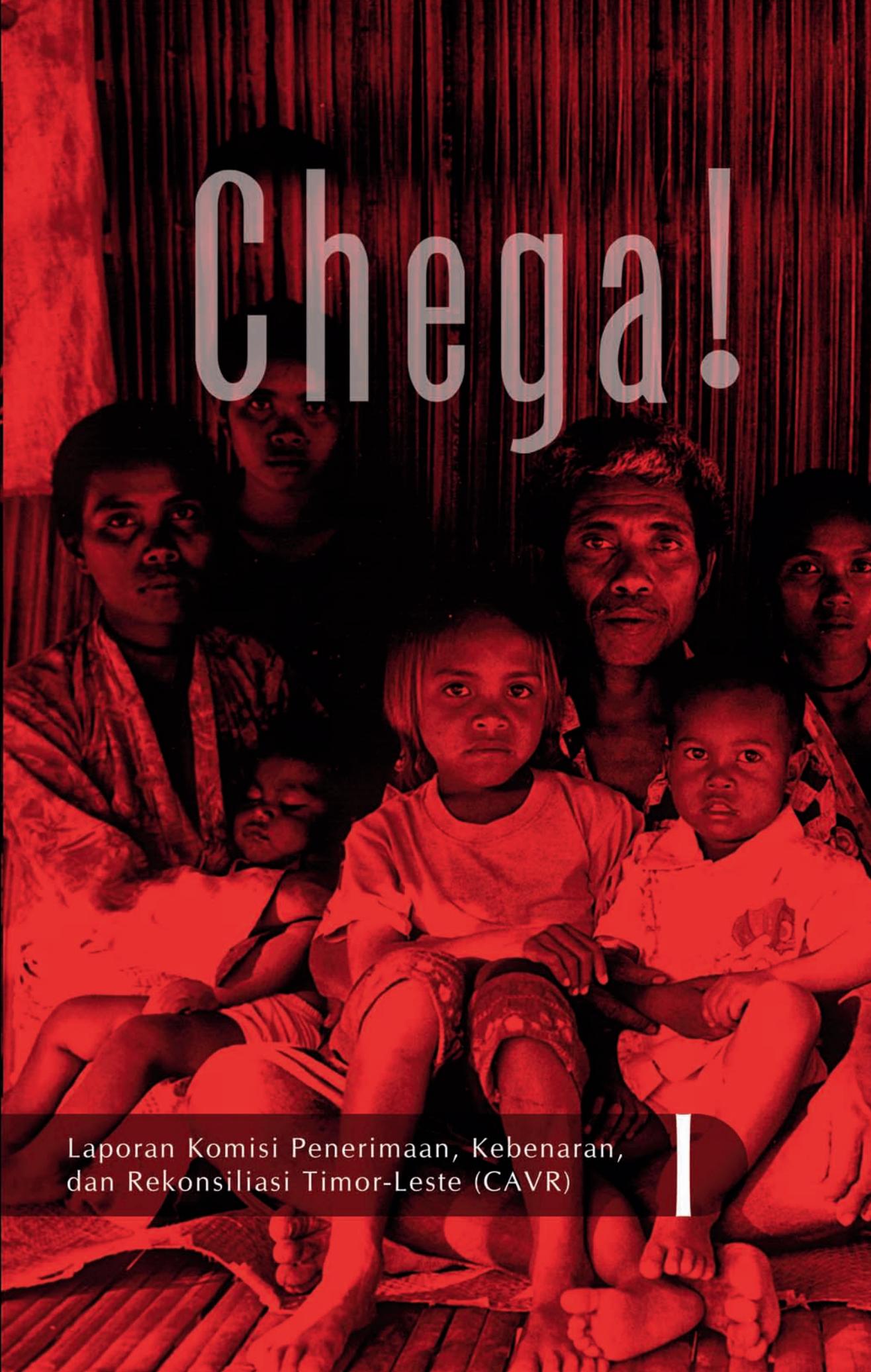


Chega!



Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR)



Chega!

V o l u m e I

TERBITAN CAVR LAINNYA:

Buku-buku Audiensi Publik:

Penahanan politik
Perempuan dan konflik
Pemindahan paksa dan kelaparan
Pembantaian
Konflik politik internal 1974 – 1976
Penentuan nasib sendiri dan masyarakat internasional
Anak dan konflik

Buku-buku lain:

Rona Ami-Nia Lian (Dengarkan suara kami)
Penjara Comarca Balide: Sebuah 'Gedung Sakral'
Laporan Eksekutif Chega!

Video dan radio dokumenter:

Dalan ba Dame (Jalan Menuju Perdamaian)



<http://www.cavr-timorleste.org>
info@cavr-timorleste.org

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

V o l u m e I

JAKARTA
KPG

Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

V o l u m e I

KPG: 950 04 10 0338

Cetakan pertama, Agustus 2010

Penyusun:

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

Foto sampul:

Poriaman Sitanggang

Pembaca akhir:

Rani Elsanti

Desain dan tata letak:

M. Roniyadi

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

**Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di
Timor-Leste - Volume I**

Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2010

xxx + 646 hlm; 150x230 mm

ISBN-13: 978-979-91-0244-7

Penerbitan buku ini didanai oleh Pemerintah Irlandia dan Jerman

Dicetak oleh PT Gramedia, Jakarta.
Isi di luar tanggungjawab percetakan.

Daftar isi

- xix** | Peta Timor-Leste
- xx** | Daftar donor
- xxi** | Prakata oleh Ifdhal Kasim,
“Memaknai dan Memetik Pelajaran dari CAVR”
- xxiii** | Kata pengantar oleh Aniceto Guterres Lopes, Ketua CAVR
- 1** | Surat penyerahan Laporan dari Komisaris Nasional CAVR

- 3** | **Bagian 1: Pendahuluan**
 - 7** | Latar belakang Komisi
 - 9** | Dari kolonialisme ke pendudukan militer
 - 13** | Pertemuan kembali: rekonsiliasi
 - 15** | Asas penyusunan Laporan
 - 15** | Kebenaran

 - 17** | Asal-mula Komisi
 - 17** | Lokakarya dan Kongres CNRT
 - 18** | Hasil konsultasi publik Komite Pengarah
 - 20** | Memilih nama Komisi
 - 21** | Regulasi Nomor 10/2001, Pembentukan Komisi
 - 22** | Kantor Interim
 - 22** | Dewan Penasihat CAVR

 - 23** | Pembentukan Komisi
 - 23** | Komisaris Nasional
 - 27** | Prinsip-prinsip dan misi Komisi
 - 28** | Komisaris Regional

 - 29** | Hal-hal dan tantangan operasional
 - 29** | Tantangan praktis bagi kerja Komisi
 - 30** | Tantangan bahasa
 - 31** | Pendekatan terpadu berbasis komunitas
 - 35** | Rencana strategis

 - 37** | Program-program inti
 - 37** | Pencarian kebenaran
 - 46** | Rekonsiliasi komunitas
 - 48** | Penerimaan dan dukungan korban

- 49 | Laporan akhir
- 51 | Arsip
- 52 | Kewajiban Komisi terhadap para peserta dalam program-program intinya

53 | Kantor nasional dan regional serta masalah kepegawaian

- 53 | Kantor Nasional
- 56 | CAVR sebagai institusi pembelajaran
- 56 | Pengembangan institusi dan pembangunan kapasitas
- 57 | Gender dan kepegawaian
- 58 | Kantor Regional dan Tim Distrik
- 59 | Gender dalam kerja distrik
- 60 | Peran staf internasional dalam Komisi

61 | Manajemen dan administrasi

- 61 | Struktur manajemen
- 61 | Administrasi
- 62 | Keuangan
- 62 | Pengurangan staf dan restrukturisasi

63 | Membangun hubungan untuk masa depan

- 63 | Hubungan langsung
- 65 | Kampanye media dan informasi
- 66 | Komunitas internasional
- 67 | Penjangkauan komunitas dan informasi publik

75 | Bagian 2: Mandat Komisi

79 | Pendahuluan

- 80 | Batasan waktu
- 81 | Persoalan-persoalan dengan relevansi khusus
- 81 | Makna 'berkaitan dengan konflik politik'
- 81 | Pelanggaran hak asasi manusia
- 82 | Definisi Komisi tentang 'pelanggaran hak asasi manusia'
- 83 | Prioritas yang diberikan pada kategori pelanggaran tertentu
- 84 | Wewenang yang berkaitan dengan penyelidikan
- 85 | Tanggung jawab hukum Komisararis dan staf
- 85 | Informasi rahasia yang diberikan kepada Komisi
- 86 | Pemakaian nama-nama tertentu dalam Laporan
- 90 | Berbagai standar yang digunakan untuk menentukan persoalan tanggung jawab dan pertanggungjawaban
- 91 | Invasi Indonesia atas Timor-Leste
- 91 | Keadilan perang dan keadilan dalam perang

- 93 | Prosedur Rekonsiliasi Komunitas
- 94 | Pendekatan Komisi yang berbasis-komunitas
- 95 | Lampiran: Prinsip-prinsip hukum yang relevan
 - 95 | Pendahuluan: Hukum internasional yang relevan

147 | Bagian 3: Sejarah konflik

- 157 | Pendahuluan
- 159 | Penjajahan Portugis atas Timor-Leste
 - 159 | Tinjauan
 - 160 | Kedatangan Portugis
 - 161 | Konsolidasi kekuasaan kolonial
 - 162 | Pemerintahan Portugis dan resistansi rakyat Timor
 - 164 | Timor Portugis pada abad ke-20
 - 165 | Gerakan internasional untuk dekolonisasi dan posisi Portugal
 - 166 | Rencana pembangunan Portugis dan berkembangnya sentimen anti-penjajah
- 167 | Perubahan di Portugal dan proses dekolonisasi
 - 167 | Tinjauan
 - 168 | MFA dan Revolusi Anyelir
 - 170 | Dampak Revolusi Anyelir di Timor Portugis
 - 170 | Pembentukan partai-partai politik di Timor Portugis
- 172 | Suasana internasional dan kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis
 - 172 | Tinjauan
 - 173 | Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Portugis
 - 174 | Indonesia dan masyarakat internasional
 - 176 | Kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis
- 180 | Proses dekolonisasi dan partai-partai politik
 - 180 | Tinjauan
 - 180 | Permulaan kesadaran politik
 - 181 | Susunan partai-partai politik
 - 183 | Perkembangan dan ketegangan internal
 - 183 | Partai-partai politik bersiap menghadapi konfrontasi bersenjata
 - 186 | Fretilin dan ancaman komunisme
 - 188 | Tidak adanya toleransi politik
 - 189 | 'Misi mustahil' Lemos Pires
 - 190 | Koalisi antara UDT dan Fretilin

- 192** | Keterlibatan Indonesia yang semakin besar di Timor Portugis: Destabilisasi dan diplomasi
- 192** | Tinjauan
 - 192** | Operasi Komodo dan peningkatan operasi rahasia militer
 - 193** | Diplomasi Indonesia
- 200** | Gerakan Bersenjata 11 Agustus dan konflik bersenjata internal
- 200** | Tinjauan
 - 201** | UDT melancarkan gerakan bersenjata 11 Agustus
 - 203** | Kegagalan melakukan negosiasi: Konflik bersenjata internal
 - 205** | UDT mundur ke perbatasan
 - 206** | Tanggapan Portugal terhadap konflik internal
 - 206** | Tanggapan Indonesia
- 208** | Timor Portugis di bawah administrasi Fretilin
- 208** | Tinjauan
 - 208** | Fretilin mengisi kekosongan
 - 209** | Tahanan dan kekerasan politik
 - 211** | Memulihkan ketertiban
 - 212** | Pemerintahan
 - 214** | Balibó: Indonesia meningkatkan intensitas operasi militer
- 216** | Deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin, dan tanggapan terhadapnya
- 216** | Tinjauan
 - 216** | Latar-belakang deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin
 - 218** | Deklarasi kemerdekaan
 - 221** | Reaksi atas deklarasi kemerdekaan
 - 223** | Invasi besar-besaran di ambang pintu
- 224** | Invasi besar-besaran
- 224** | Tinjauan
 - 224** | Keputusan Indonesia untuk menginvasi dan melakukan perang terbuka
 - 226** | Dili mempersiapkan strategi pertahanan
 - 226** | Berbagai persiapan militer Indonesia: Operasi Seroja
 - 227** | Invasi Dili dan Baucau
 - 232** | Tanggapan PBB terhadap invasi besar-besaran
- 233** | Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan dan upaya Indonesia untuk meresmikan integrasi
- 233** | Tinjauan

- 234 | ABRI melakukan konsolidasi; Indonesia mendirikan 'pemerintahan sementara'
- 235 | Fretilin mundur, pembantaian tahanan
- 235 | Pergerakan ABRI, awal 1976
- 236 | Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan
- 237 | Fretilin kembali menyusun kekuatan
- 238 | Indonesia meresmikan integrasi
- 240 | Operasi Seroja berlanjut – pesawat Bronco OV-10 buatan AS mulai digunakan
- 240 | Kebuntuan militer, akhir 1976

- 241 | 'Pengepungan dan penghancuran': tahap akhir Operasi Seroja, 1977 – 1979
 - 241 | Tinjauan
 - 242 | Penduduk sipil di gunung-gunung
 - 242 | Kapasitas ABRI terkuras dan kepercayaan diri awal Fretilin
 - 243 | Amerika Serikat memimpin dalam mempersenjatai-ulang militer Indonesia
 - 244 | Perpecahan internal Fretilin dan pembersihan berdarah
 - 246 | ABRI mengintensifkan operasi militer: pengepungan dan penghancuran (Agustus 1977 – Agustus 1978)
 - 250 | Penyerahan diri: Turun dari Matebian

- 251 | Penyerahan diri, pemukiman kembali, dan kelaparan
 - 251 | Tinjauan
 - 252 | Penyerahan dan eksekusi tahanan
 - 253 | Kamp-kamp penampungan sementara
 - 254 | Kamp penahanan jangka panjang dan strategi keamanan ABRI
 - 255 | Wilayah tertutup
 - 256 | Bantuan ICRC dan CRS
 - 257 | Ataúro sebagai pulau penjara
 - 258 | Berbagai kamp penahanan ditutup

- 259 | Operasi keamanan
 - 259 | Tinjauan
 - 260 | Situasi di Dili dan seluruh Timor-Leste (1979 – 1980)
 - 261 | Pemberontakan pertama: Dili, Juni 1980
 - 261 | 'Pagar betis': Operasi Kikis
 - 264 | Konsekuesi operasi

- 265 | Membangun Resistansi kembali
 - 265 | Tinjauan
 - 266 | Sejumlah anggota Fretilin yang bertahan setelah serangan 1978 – 1979
 - 267 | Kembali menyusun kekuatan

- 269 | Konferensi Reorganisasi Nasional (Maret 1981)
- 270 | Pertumbuhan Resistansi
- 271 | Resistansi di bawah pimpinan Xanana Gusmão:
Menuju persatuan nasional
- 272 | Gereja Katolik

- 273 | Gencatan senjata 1983 dan masa sesudahnya
 - 273 | Tinjauan
 - 274 | Pemilu Indonesia di Timor-Leste: 1982
 - 275 | Perubahan personel sipil dan militer Indonesia, serta berbagai aksi Resistansi
 - 275 | Pendekatan baru militer Indonesia: Negosiasi
 - 277 | Gencatan Senjata
 - 277 | Pengangkatan Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI: 1983
 - 278 | Monsignor Lopes dicopot
 - 278 | Gencatan senjata dirongrong
 - 280 | Berakhirnya gencatan senjata

- 282 | Konsolidasi dan awal perubahan: 1984 – 1991
 - 282 | Tinjauan
 - 283 | Perkembangan Resistansi
 - 284 | Represi dan pemenjaraan
 - 285 | Kebangkitan gerakan pemuda klandestin
 - 286 | Gereja Katolik
 - 287 | Situasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa
 - 288 | Kunjungan Paus Yohanes Paulus II
 - 290 | Jakarta membuka Timor-Leste
 - 291 | Perkembangan internasional menjelang akhir dasawarsa 1980-an

- 292 | Titik-balik
 - 292 | Tinjauan
 - 292 | Pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991
 - 295 | Dampak internasional Santa Cruz
 - 296 | Penangkapan Xanana Gusmão
 - 297 | Jaringan klandestin pelajar
 - 299 | Rencana damai CNRM dan inisiatif diplomatik
 - 300 | Kasus pengadilan internasional: Portugal vs. Australia (1991 – 1995)
 - 301 | Hadiah Nobel Perdamaian 1996
 - 302 | Perserikatan Bangsa-Bangsa

- 303 | Dari Reformasi ke pengumuman tentang Jajak Pendapat

- 303 | Tinjauan
- 304 | Jatuhnya Soeharto
- 306 | CNRT dan kampanye diplomatik
- 306 | Dampak Reformasi di Timor-Leste
- 307 | Munculnya para milisi
- 310 | Xanana Gusmão mengimbau toleransi
- 310 | Negosiasi tentang paket otonomi
- 312 | Peningkatan teror milisi
- 314 | Kesepakatan 5 Mei
- 315 | Pengaturan keamanan dalam Kesepakatan 5 Mei

- 316 | **Jajak Pendapat**
 - 316 | Tinjauan
 - 317 | Penempatan UNAMET
 - 317 | Komisi Pemilihan
 - 318 | Pilihan
 - 318 | Koordinasi pemerintah Indonesia untuk Jajak Pendapat
 - 318 | Kehadiran masyarakat internasional di Timor-Leste
 - 319 | Pemantau dari Timor-Leste dan Indonesia
 - 319 | Pengamanan untuk Jajak Pendapat
 - 321 | Kekerasan oleh TNI-Milisi: Juni – Juli
 - 322 | Dare II
 - 322 | Pendaftaran pemilih
 - 323 | Kampanye
 - 326 | Situasi keamanan memburuk: Agustus
 - 328 | Persiapan terakhir Jajak Pendapat
 - 328 | Jajak Pendapat
 - 329 | Penghitungan dan hasil

- 330 | **Indonesia meninggalkan Timor-Leste: Bumi Hangus**
 - 330 | Tinjauan
 - 332 | Tindak kekerasan sesudah pengumuman hasil pemungutan suara
 - 333 | TNI resmi mengambil kendali
 - 335 | Markas UNAMET
 - 336 | Meningkatnya tekanan internasional
 - 338 | Evakuasi penduduk secara paksa
 - 339 | Interfet datang: TNI ditarik
 - 340 | Pembentukan UNTAET: Resolusi Dewan Keamanan 1272, 25 Oktober 1999
 - 341 | Pulang

371 | Bagian 4: Rezim pendudukan

- 375 | Pendahuluan
- 376 | Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan perannya di Timor-Leste
 - 376 | Pengantar
 - 377 | Latar-belakang ABRI
 - 385 | Struktur organisasi ABRI di Timor-Leste
- 396 | Militerisasi masyarakat Timor-Leste
 - 396 | Pendahuluan
 - 398 | Militerisasi Timor-Leste pra-Indonesia
 - 399 | Militerisasi partai politik Timor-Leste oleh Indonesia sebelum pendudukan
 - 401 | Pembentukan batalion tempur ABRI beranggotakan orang Timor-Leste
 - 402 | Berbagai kelompok paramiliter awal (1976 – 1981)
 - 403 | Paramiliter dekade 1980
 - 404 | Pasukan pertahanan sipil
 - 406 | 'Anggota militer triwulan', Milsas (1989 – 1992)
 - 407 | Tenaga Bantuan Operasi (TBO)
 - 408 | 'Intel'—mata-mata orang Timor-Leste
 - 410 | 1990-an dan perhatian pada pemuda
 - 411 | Pasukan pembunuh
 - 412 | Milisi (1988 – 1999)
- 424 | Pemerintahan sipil
 - 425 | Pemerintahan sementara di Timor-Leste

447 | Bagian 5: Resistansi: struktur dan strategi

- 451 | Pendahuluan
- 454 | Fretilin dan *base de apoio*
 - 455 | Pengorganisasian masyarakat sipil
 - 458 | Pengorganisasian militer
 - 461 | Program sosial-ekonomi Fretilin
 - 468 | Strategi
 - 471 | Perang rakyat jangka panjang
 - 473 | Konflik internal
- 480 | Akhir *base de apoio*

- 484 | Restrukturisasi Resistansi (1981 – 1987)
 - 485 | Restrukturisasi Resistansi untuk menghadapi keadaan baru
 - 490 | Strategi
- 495 | Falintil pasca-1987
- 503 | Gerakan perjuangan bawah-tanah

519 | Bagian 6: Profil pelanggaran hak asasi manusia

- 529 | Pendahuluan
 - 530 | Rangkuman temuan-temuan penting
 - 532 | Tinjauan manajemen informasi dan metode pengumpulan data Komisi
 - 533 | Estimasi pelanggaran bersejarah di Timor-Leste dan batasannya
- 536 | Pelanggaran-pelanggaran fatal: analisis
 - 536 | Latar-belakang dan tinjauan analisis statistik pelanggaran fatal
 - 538 | Tujuan analisis
 - 538 | Tinjauan data dan metode
 - 540 | Perkiraan pembunuhan, kematian karena kelaparan dan sakit, dan pemindahan
 - 550 | Analisis statistik deskriptif mengenai pelanggaran fatal yang dilaporkan kepada Komisi
- 571 | Pelanggaran nonfatal
 - 571 | Pengantar
 - 572 | Tinjauan temuan statistik mengenai pelanggaran nonfatal
 - 574 | Keterangan mendalam analisis statistik mengenai pelanggaran nonfatal
- 634 | Studi kasus Mau Chiga: analisis
 - 634 | Pengantar
 - 634 | Latar-belakang usaha pendokumentasian
 - 634 | Batasan data
 - 635 | Latar-belakang historis
 - 636 | Analisis statistik deskriptif pelanggaran yang dilaporkan pada Proyek Dokumentasi Mau Chiga
- 644 | Ringkasan dan kesimpulan

Daftar tabel

- 68** | Tonggak-tonggak sejarah Komisi
- 386** | Struktur komando militer di Timor-Leste
- 412** | Milisi-milisi di Timor-Leste, 1975 - 1999
- 425** | Struktur pemerintahan Indonesia, dengan satuan yang setara dari sistem Portugis serta militer Indonesia
- 430** | Komposisi anggota DPR Provinsi Timor Timur berdasarkan fraksi, 1980 - 1997
- 434** | Bupati berdasarkan asal-usul dan afiliasi, 1976 - 1999
- 456** | Struktur regional Fretilin mulai Mei 1976
- 457** | Struktur administrasi Fretilin
- 488** | Pembagian wilayah (region) secara militer pada Konferensi Reorganisasi Nasional
- 552** | Penghitungan kejadian pembunuhan penduduk sipil, 1975
- 556** | Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan
- 560** | Persentase pertanggungjawaban atas pembunuhan yang dilaporkan, berdasarkan periode, 1975 - 1999
- 569** | Pelanggaran yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan distrik, 1974 - 1999
- 570** | Pelanggaran fatal yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis pelanggaran, 1974 - 1999
- 571** | Pelanggaran fatal yang dilaporkan dan penahanan, berdasarkan tahapan, 1974 - 1999
- 575** | Pelanggaran nonfatal berdasarkan sumber data, 1974 - 1999
- 577** | Distribusi relatif korban per pelanggaran, data CAVR
- 577** | Distribusi relatif korban per pelanggaran, data Fokupers
- 578** | Distribusi relatif korban per pelanggaran, data Amnesty International
- 582** | Pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi
- 595** | Pelanggaran berdasarkan distrik
- 600** | Pola korban menurut jenis kelamin
- 600** | Pola korban menurut jenis kelamin dalam lintas waktu
- 602** | Pola korban menurut jenis kelamin di tiap distrik
- 603** | Pola korban menurut usia
- 603** | Pola korban menurut usia per tahun, 1974 - 1999
- 605** | Pola korban menurut usia per distrik
- 612** | Tabel distribusi data berdasarkan data CAVR, Fokupers, Amnesty International
- 623** | Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis pelanggaran, 1974 - 1999
- 624** | Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan tahap, 1974 - 1999
- 625** | Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan distrik, 1974 - 1999
- 626** | Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 626** | Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan usia korban, 1974 - 1999

- 638 | Tabel penyebaran lamanya periode dari peristiwa pemindahan penduduk Mau Chiga, 1982 - 1985
- 639 | Tabulasi silang lamanya periode tindak pemindahan penduduk Mau Chiga menurut lokasinya, 1982 - 1985
- 642 | Tabel penyebaran pelanggaran fatal yang dilaporkan menurut afiliasi politik korban, 1974 - 1999
- 642 | Penyebaran pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilaporkan menurut afiliasi politik dan lokasi geografis, 1974 - 1999

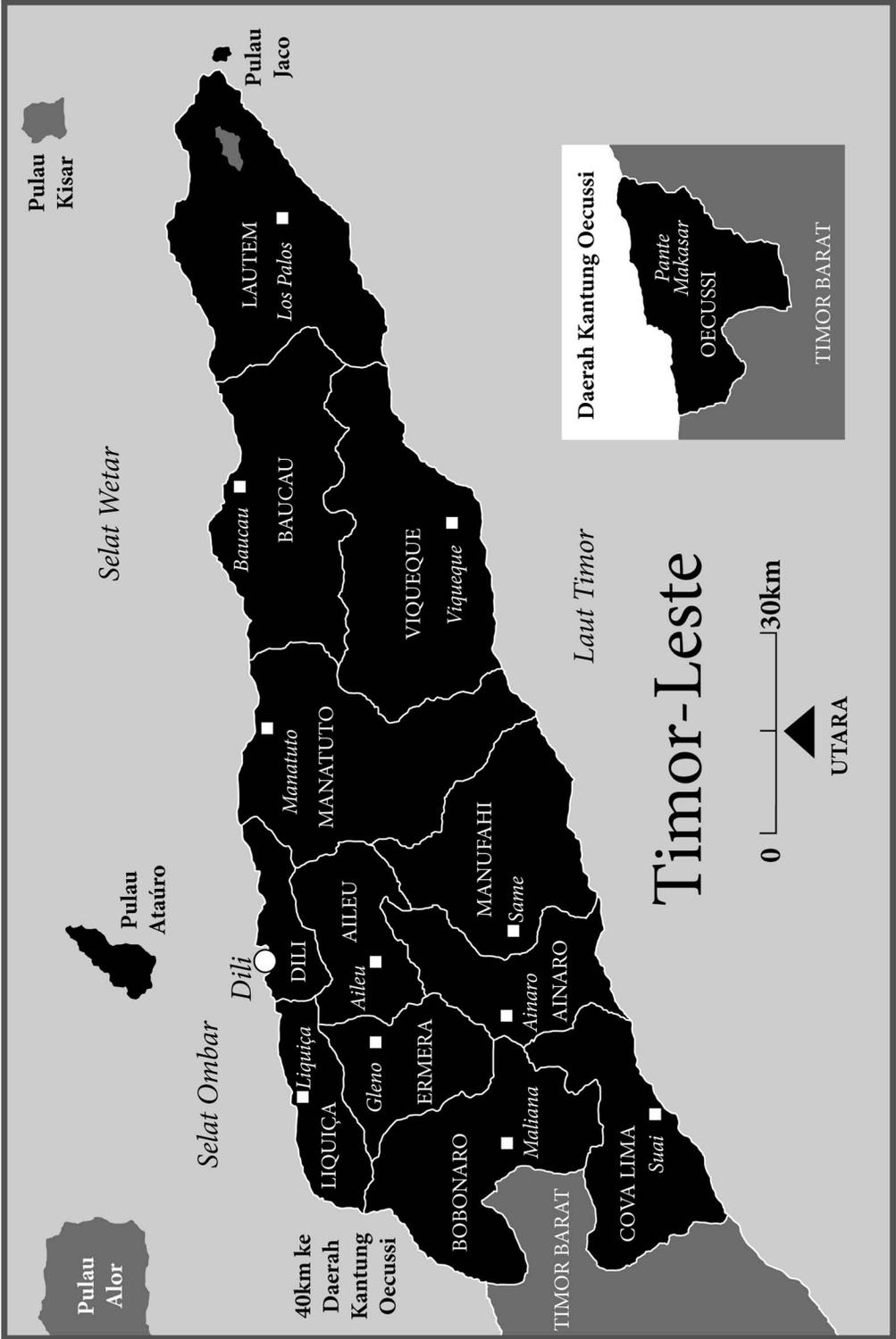
Daftar grafik

- 540 | Perkiraan jumlah total pembunuhan di Timor-Leste
- 541 | Perkiraan total pembunuhan di Timor-Leste
- 544 | Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste
- 545 | Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste
- 546 | Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste
- 548 | Perkiraan peristiwa pemindahan di Timor-Leste (dengan rentang kesalahan)
- 549 | Jumlah total rumahtangga yang terpindahkan di Timor-Leste berdasarkan daerah
- 551 | Jumlah kejadian pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 552 | Jumlah kejadian penghilangan yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 553 | Penghitungan pelanggaran yang dilaporkan, berdasarkan jenis dan distrik
- 554 | Jumlah penghilangan berdasarkan wilayah secara lintas-waktu, 1974 - 1999
- 555 | Jumlah pembunuhan penduduk sipil secara lintas-waktu, 1974 - 1999
- 558 | Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974 - 1999, yang dilakukan oleh satuan teritorial
- 558 | Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974 - 1999, yang dilakukan oleh satuan nonteritorial
- 559 | Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974 - 1999, yang dilakukan oleh pasukan Pertahanan Sipil
- 561 | Jumlah korban penduduk sipil berdasarkan ukuran kelompok, 1974 - 1999
- 561 | Jumlah korban tindakan penghilangan berdasarkan ukuran kelompok, 1974 - 1999
- 562 | Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 563 | Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 564 | Angka tindak pembunuhan penduduk sipil, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 565 | Angka tindak pembunuhan penduduk sipil, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 565 | Tingkat pelanggaran pembunuhan penduduk sipil yang spesifik berdasarkan usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 566 | Tingkat pelanggaran pembunuhan penduduk sipil yang spesifik berdasarkan usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999

- 566** | Tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 567** | Tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 568** | Jumlah tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 568** | Jumlah tindak penahanan yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 579** | Jumlah pelanggaran nonfatal yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 580** | Jumlah penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan, 1999
- 581** | Pelanggaran dalam lintas-waktu
- 583** | Jumlah pelanggaran nonfatal yang dikaitkan dengan Fretilin, UDT, dan Apodeti, 1975
- 584** | Pelanggaran dalam lintas-waktu
- 585** | Pelanggaran nonfatal yang dilakukan oleh satuan Pertahanan Sipil dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 585** | Pelanggaran yang dilakukan oleh Kopassus dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 586** | Pelanggaran yang dilakukan oleh Polisi dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 586** | Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 587** | Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1999
- 588** | Tindak penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 589** | Tindak penyiksaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 590** | Tindak penganiayaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 590** | Tindak penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 591** | Tindak penyiksaan yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999
- 591** | Tindak penganiayaan yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999
- 592** | Tindak pelanggaran berbasis seks yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 593** | Tindak pelanggaran berbasis seks yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999
- 594** | Tindak pelanggaran ekonomi/properti yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 596** | Bagan pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik
- 597** | Jumlah pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik
- 598** | Jumlah pelanggaran nonfatal berdasarkan wilayah dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 606** | Tingkat penahanan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 606** | Tingkat penyiksaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 607** | Tingkat penganiayaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999

- 607** | Tingkat penahanan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 608** | Tingkat penyiksaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 608** | Tingkat penganiayaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 609** | Jumlah tindak pemerkosaan yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 609** | Tingkat pemerkosaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 610** | Tingkat perbudakan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 610** | Tingkat perbudakan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 611** | Jumlah kekerasan seksual yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 611** | Tingkat kekerasan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 614** | Pelanggaran dalam lintas-waktu
- 615** | Jumlah korban tindakan penahanan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974 - 1999
- 615** | Jumlah korban tindakan penyiksaan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974 - 1999
- 616** | Jumlah korban tindakan penganiayaan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974 - 1999
- 617** | Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 618** | Jumlah tindakan penyiksaan yang tercatat, dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 618** | Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 619** | Jumlah tindakan pengancaman yang tercatat, dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 619** | Jumlah tindakan kekerasan berbasis seksual yang tercatat, dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 620** | Jumlah pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik
- 621** | Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 628** | Jumlah tahanan yang tercatat di Ataúro, Juni 1980 - Oktober 1984
- 628** | Jumlah penahanan yang tercatat, di dalam dan di luar Ataúro, 1974 - 1999
- 629** | Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 630** | Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1979
- 630** | Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1980 - 1989
- 631** | Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1990 - 1998
- 631** | Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1999
- 632** | Jumlah penahanan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban
- 632** | Jumlah penyiksaan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban

- 633 | Tindakan penganiayaan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 633 | Tindakan pelanggaran properti/ekonomi yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 637 | Jumlah korban pemindahan yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 640 | Pelanggaran fatal dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 644 | Jumlah kematian akibat kelaparan/sakit yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999



Tugas Komisi telah dimungkinkan berkat kebaikan dan bantuan dari organisasi pemerintah, lembaga multilateral, dan organisasi non-pemerintah berikut ini:

- Australian Business Volunteers
- Australian Volunteers International
- Australian Youth Ambassadors for Development
- Australia-East Timor Capacity Building Facility
- Benetech (Human Rights Data Analysis Group)
- Catholic Relief Services (Amerika Serikat) di Kupang
- Community Empowerment Program (CEP), didanai oleh Trust Fund for East Timor dan dikelola oleh Bank Dunia
- HIVOS (Belanda)
- International Center for Transitional Justice
- Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia
- Komisi Eropa
- MCC (Mennonite Central Committee)
- PBB (melalui UNTAET, UMNISSET, dan UNOTIL)
- Pemerintah Amerika Serikat
- Pemerintah Australia melalui AusAID
- Pemerintah Denmark
- Pemerintah Finlandia
- Pemerintah Jerman melalui GTZ
- Pemerintah Irlandia
- Pemerintah Jepang
- Pemerintah Kanada melalui CIDA
- Pemerintah Kerajaan Inggris
- Pemerintah Norwegia
- Pemerintah Portugal
- Pemerintah Selandia Baru
- Pemerintah Swedia
- Pikul, Timor Barat
- UNDP
- UNHCR
- UN Volunteers
- United States Institute for Peace

Prakata

Memaknai dan Memetik Pelajaran dari CAVR

Oleh: Ifdhal Kasim, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Pada 2005, laporan dari Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR), yang berjudul *Chega!* (kata dalam bahasa Portugis yang berarti “tidak lagi, hentikan, cukup!”) diserahkan kepada Presiden Timor-Leste, Xanana Gusmao, setelah proses panjang mendokumentasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama kurun waktu 1975-1999.

Chega! merangkai lebih daripada 8.000 kesaksian korban dan saksi serta lebih daripada 1.300 kesaksian mantan milisi yang mengikuti proses rekonsiliasi yang difasilitasi oleh CAVR. CAVR menemukan bahwa Indonesia bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi selama Timor Timur menjadi de facto provinsi ke-27 Indonesia. CAVR juga menemukan bahwa gerakan perlawanan di Timor-Leste melakukan kejahatan perang dan pelanggaran lainnya, namun dalam skala yang jauh lebih kecil dari pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. (Pada saat laporan ini dipublikasikan, seorang pejabat tinggi Indonesia membuat pernyataan yang menyangkal temuan CAVR tentang penggunaan bom kimia [*napalm*] pada operasi militer di Timor-Leste. Selain itu, tidak ada tanggapan yang berarti, meskipun CAVR merekomendasikan bahwa *Chega!* didiseminasi seluas-luasnya di Indonesia, dan pihak Indonesia mengakui dan meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah terjadi.)

Tiga tahun kemudian Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), sebuah komisi yang dibentuk secara bilateral oleh kedua pemerintah Indonesia dan Timor-Leste, meluncurkan sebuah laporan yang diberi judul Per Memoriam Ad Spem yang berarti “Dari Ingatan Menuju Harapan”. Laporan ini telah membuka kebenaran yang selama ini disangkal, suatu “*conclusive truth*” tentang apa yang terjadi sekitar Jajak Pendapat 1999. Memang dibanding temuan CAVR, tak banyak hal yang baru diungkap di dalamnya. Tetapi nilai terpenting laporan KKP ini adalah mengubah tabiat yang suka menyangkal (*culture of denial*) di kalangan penguasa kita ke arah pengakuan terhadap kebenaran; mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Perlu dicatat bahwa CAVR memiliki mandat yang lebih luas daripada penyelidikan yang dilakukan oleh KKP maupun KPP-HAM yang dibentuk Komnas HAM sebelumnya. Laporan CAVR mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi selama 25 tahun antara 1975 – 1999, dan menyertakan temuan-temuan serta rekomendasi. Perinciannya dapat dibaca dalam buku dengan lima volume ini.

Chega! merupakan sebuah kesaksian yang meresahkan. Laporan ini akan menyentak para pembaca Indonesia yang mengira bahwa di bawah rezim Soeharto semuanya berjalan damai di provinsi Indonesia ke-27 saat itu. Halaman demi halaman kita dapat membaca cerita-cerita korban pembantaian, perkosaan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan berbagai kejahatan yang tidak terbayangkan. Terlihat dengan jelas betapa sebuah keangkuhan yang menjustifikasi digunakannya kekerasan demi pencapaian target politik akhirnya akan gagal. Membaca sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang bertubi-tubi terjadi di Timor-Leste akan membantu kita memahami dengan lebih baik mengapa setelah 24 tahun sebagian besar orang Timor-Leste memilih untuk berpisah dari Indonesia.

Presiden Ramos-Horta telah mendorong rakyat Timor-Leste untuk belajar dari *Chega!*. Demikian pula masyarakat di Indonesia dapat belajar dari *Chega!* Berkat penerbitan laporan tersebut oleh KPG, pembelajaran ini menjadi dimungkinkan. Laporan ini adalah suatu kontribusi penting ke arah demokratisasi di Indonesia dan reformasi sektor keamanannya. Temuan serta rekomendasi-rekomendasinya sebaiknya disebarluaskan dan didiskusikan dengan bebas, guna menghapuskan impunitas dan memastikan agar pelanggaran semacam itu tidak terulang kembali di Indonesia atau di manapun.

Temuan-temuan CAVR sangat penting bagi kita sebagai bangsa. Temuan CAVR ini menjadi cermin bagi kita, dan menjadikannya sebagai pelajaran yang berharga agar tidak mengulangi lagi di masa depan. Untuk itu, langkah-langkah pembaruan institusi-institusi yang terkait dalam berbagai pelanggaran yang telah dipaparkan harus kita ambil. Selain itu, yang lebih penting sekarang adalah melaksanakan tanggung jawab kita, yang tertuang dalam rekomendasi-rekomendasi CAVR dan KKP tersebut. Pelaksanaan rekomendasi tersebut akan memastikan kita menyatakan: *Nunca Mais!*

Kata Pengantar

Pidato oleh Aniceto Guterres Lopes, Ketua CAVR*

Yang Mulia, Presiden Kay Rala Xanana Gusmão; Presiden Parlemen Nasional Francisco Guterres Lú-Olo; Perdana Menteri Dr. Mari Alkatiri; Ketua Pengadilan Tinggi Dr. Claudio Ximenes; Dr. Sukehiro Hasegawa, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal; Para Anggota Parlemen; Para Menteri Pemerintah; Yang terhormat anggota Korps Diplomatik dan komunitas donor. Para wakil Gereja, komunitas keagamaan, dan organisasi-organisasi non-pemerintah, Rekan-rekan Komisararis dan staf CAVR, teman-teman yang terkasih.

Hari ini adalah hari terakhir dari masa amanat operasi CAVR dan kesempatan bagi CAVR untuk menggenapi tugas terakhirnya—penyerahan Laporan kami kepada Presiden Republik. Laporan ini telah ditulis sesuai dengan Regulasi 10/2001 yang mewajibkan Komisi ini menyusun dan menyampaikan kepada umum suatu laporan mengenai kegiatan-kegiatannya, temuan-temuannya, dan rekomendasi-rekomendasinya mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks konflik politik selama kurun waktu 25 tahun mulai 1974 sampai dengan 1999. Sesuai dengan amandemen Parlemen Nasional, Regulasi ini mengharuskan Komisi untuk menyampaikan Laporrannya kepada Presiden Republik sebelum ditutup. Itulah sebabnya mengapa kita berada di sini pada hari ini.

Lima tahun telah berlalu sejak CAVR digagas pada tahun 2000. Dalam tahun-tahun ini Timor-Leste telah mengalami kemajuan dalam banyak hal dan terus melangkah ke depan. Kalau begitu, mengapa ketika Timor-Leste mengarahkan pandangan ke masa depan disampaikan suatu Laporan mengenai masa lalu?

Kegunaan sejarah

Jawaban sederhana untuk pertanyaan ini ialah bahwa Komisi melakukan apa yang diminta darinya, yaitu menyelidiki dan melaporkan masa lalu kita yang tragis. Karena hasil dari tugas ini adalah suatu Laporan yang menyentuh banyak masalah yang sulit dan peka, penting untuk mengingat bahwa CAVR secara resmi ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Tugas Komisi ditetapkan oleh hukum, ditulis dalam Konstitusi, disahkan oleh Parlemen sekarang pada lebih daripada dua kesempatan, dan didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta masyarakat

* Presentasi Laporan CAVR kepada Presiden Republik dan penutupan CAVR / Salão Nobre, Lahane, 31 Oktober 2005

internasional. Para Komisaris rekan saya dan saya diharuskan di bawah sumpah untuk menyampaikan, tanpa rasa takut maupun pemihakan, kebenaran mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan semua pihak dalam gejala perjalanan Timor-Leste menuju kemerdekaan. Ini meliputi penyampaian kebenaran mengenai peran masyarakat internasional. Laporan yang ada di hadapan Anda sekalian ini bukanlah hasil prakarsa atau semangat pribadi. Ia adalah hasil dari suatu proses yang secara resmi dimandatkan oleh Negara.

Akan tetapi, pertanyaan tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih mendalam: mengapa Timor-Leste memilih menghadapi masa lalunya yang sulit? Sebagai negara miskin sumberdaya yang dibebani dengan tantangan yang luarbiasa, bisa saja Timor-Leste tidak melakukan apa-apa atau memilih memaafkan dan melupakan. Tetapi bangsa kita memilih pertanggungjawaban untuk pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, menyelenggarakannya secara menyeluruh untuk kejahatan berat dan kurang berat—tak seperti sebagian negara yang keluar dari konflik dan memusatkan perhatian hanya pada satu atau dua masalah, serta memperlihatkan betapa orang-orang dan masyarakat mengalami kerusakan luarbiasa apabila kekuasaan digunakan dengan impunitas. CAVR didirikan sebagai bagian dari proses ini. Seperti mekanisme keadilan transisional lainnya di Amerika Latin, Afrika, dan Eropa, misi kami adalah menegakkan pertanggungjawaban untuk memperdalam dan memperkuat prospek bagi perdamaian, demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia di negara kita yang baru merdeka ini. Inti darinya adalah pengakuan bahwa korban tidak hanya punya hak atas keadilan dan kebenaran tetapi bahwa keadilan, kebenaran, dan rasa saling memahami itu sangat mendasar bagi pemulihan dan rekonsiliasi orang-orang dan bangsa. Misi kami tidak digerakkan oleh keinginan balas dendam atau keterpesonaan yang kelam ataupun politis terhadap masa lalu. CAVR diwajibkan untuk mengarahkan perhatian pada masa lalu demi kepentingan masa depan—masa depan Timor-Leste dan masa depan sistem internasional yang, sebagaimana diperlihatkan oleh Laporan ini, juga harus banyak belajar dari pengalaman Timor-Leste.

Keputusan para pemimpin kami untuk menghadapi masa lalu melalui proses CAVR mendapat dukungan luas masyarakat. Buktinya bisa dilihat dalam kerjasama luarbiasa yang diberikan kepada semua kegiatan Komisi oleh semua lapisan masyarakat. Ribuan orang Timor-Leste dari seluruh penjuru negeri memberikan pernyataan pribadi kepada CAVR dan, berpartisipasi serta mendukung acara dan pertemuan rekonsiliasi di tingkat distrik dan nasional meskipun partisipasi itu kerap menimbulkan rasa sakit. Pemerintah, Parlemen, partai-partai politik, tokoh-tokoh politik penting, masyarakat sipil, dan Gereja setiap saat juga memberikan kerjasama yang luarbiasa baik, secara moral maupun praktis. Dukungan yang diberikan kepada CAVR itu sedemikian rupa sehingga CAVR tidak pernah sekalipun mempertimbangkan untuk menggunakan wewenangnya untuk menggeledah dan menyita. Hanya satu kesimpulan yang bisa ditarik: rakyat Timor-Leste sangat memahami prinsip-prinsip dan proses CAVR sebagai cara terbaik untuk membangun masa depan yang stabil dan bebas dari kekerasan yang telah menodai masa lalu kita.

Laporan CAVR

Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa patah kata mengenai Laporan ini.

Laporan ini sangat panjang, lebih daripada 2.000 halaman. Ada dua sebabnya. Pertama, mandat CAVR meliputi masa 25 tahun konflik berkepanjangan yang mencakup berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Juga ada banyak pelaku yang terlibat, baik dalam negeri maupun internasional, sehingga menghasilkan suatu campuran yang rumit dan dinamis dari berbagai faktor. Banyak halaman diperlukan untuk mencatat semua ini. Kedua, Laporan ini adalah semacam perjanjian dengan para korban. Laporan ini didasarkan terutama pada kesaksian dari para korban dan dimaksudkan untuk menyumbang kepada penyembuhan melalui pemulihan martabat mereka. Ini juga memerlukan ruang. CAVR berharap agar para korban akan melihat pengalaman dan penderitaan mereka tecermin jelas dalam Laporan ini dan mengetahui bahwa yang terjadi pada mereka dihargai di Timor-Leste dan dipelihara untuk semua generasi mendatang. Selain mengeluarkan Laporan Akhir, CAVR juga menerbitkan kesaksian terpilih dengan kata-kata para korban sendiri yang disampaikan dalam tujuh audiensi publik nasional kami. CAVR berharap bahwa pengutamaan kepentingan dan cara pandang para korban dan orang-orang yang selamat dengan cara seperti ini akan menyumbang lebih jauh pada pemulihan dan perwujudan suatu masa depan yang bebas dari kekerasan.

Meskipun merupakan medium yang sangat terperinci dan deskriptif untuk suara-suara banyak orang Timor-Leste yang menjadi korban, Laporan ini adalah hasil penyelidikan dan penelitian yang tidak memihak dan dilakukan dengan teliti dan seksama. Mandat kami mengharuskan CAVR untuk menetapkan berbagai kecenderungan, pola, dan faktor. Mandat juga mengharuskan CAVR untuk menetapkan pertanggungjawaban dan mengidentifikasi orang, badan, lembaga, dan organisasi yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, CAVR tidak mempunyai agenda politik dan dengan teliti menghindari pelebih-lebihan atau keinginan untuk menghinakan atau membalas dendam. Di masa lalu, pelanggaran hak asasi manusia bisa saja digunakan untuk memobilisasi dukungan politik dan menjatuhkan pihak lawan. Satu-satunya tujuan CAVR adalah mencatat kebenaran sehingga akibat-akibat yang mengerikan dari kekerasan yang terekam dalam dokumen ini dapat menangkal pengulangannya di masa depan dan mengakhiri impunitas. Hasilnya tidak sempurna, tetapi CAVR tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki semua kasus atau menyimpulkan kebenaran mengenai semua masalah. Tetapi kami percaya bahwa Laporan ini memberi rakyat Timor-Leste gambaran besar tentang apa yang terjadi selama 25 tahun dan akan membantu masyarakat mengerti sejarah kita dan kekuatan-kekuatan yang telah berpengaruh pada nasib kita.

Berlawanan dengan panjangnya Laporan ini, judulnya hanya satu kata. Yaitu kata bahasa Portugis “Chega!” yang terjemahannya kira-kira adalah “tidak lagi, berhenti, cukup!” Kami merasa bahwa satu kata ini, yang menjadi judul untuk versi semua bahasa, menangkap pesan inti seluruh laporan ini dengan cara yang memikat. Kami yakin ini juga merupakan pesan inti yang diinginkan para korban untuk kita semua

dengarkan dan janjikan, yaitu bahwa mimpi buruk perorangan dan masyarakat yang diuraikan dalam Laporan ini tidak boleh terulang kembali.

Dalam menyusun Laporan ini, CAVR harus bekerja dalam beberapa bahasa dan menyampaikan Laporan ini dalam beberapa bahasa. Ini adalah keharusan resmi dan praktis yang memberikan beban berat tambahan pada Komisi. Akan tetapi saya ingin menegaskan bahwa CAVR juga sangat menyadari bahwa “Persoalan Timor-Leste,” begitu yang selama ini disebut dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah persoalan internasional, dan penting untuk menjamin bahwa Laporan ini bisa dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam bahasa mereka masing-masing. Laporan ini akan tersedia dalam bahasa Portugis, Indonesia, Inggris, dan setidaknya sebagian dalam bahasa Tetum. Dalam hal ini saya harus membuat jelas bahwa para Komisaris secara resmi mengesahkan teks Laporan ini dalam bahasa Indonesia. Kami memeriksa teks dalam bahasa-bahasa lain tetapi versi bahasa Indonesia dari Laporan ini yang harus dijadikan pegangan kalau ada salah penafsiran mengenai Laporan atau kerancuan mengenai apa yang ingin kami sampaikan.

Arsip

Dalam melaksanakan penelitiannya, CAVR mengumpulkan banyak dokumentasi untuk kurun waktu 1974 – 1999. Bukti yang sangat banyak ini sekarang hampir memenuhi dua ruang besar di Comarca. Saya ingin menyampaikan empat hal mengenai koleksi ini. Pertama, arsip ini unik dan harus dijaga dengan sangat hati-hati—ini adalah kesaksian hidup dari para korban dan aktor penting dari periode yang menyaksikan baik lahirnya negeri ini dengan penuh kesakitan, maupun tahapan memalukan dalam politik internasional. Ia merupakan sumber yang sangat bernilai untuk Departemen Pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan bahan-bahan untuk pengajaran di kelas dan ruang-ruang ceramah. Karena itu saya berharap bahwa arsip ini akan mendapatkan dukungan berkelanjutan untuk menjamin kelestarian, aksesibilitas, dan penggunaan dalam jangka panjang. Ketiga, koleksi ini harus terus diperkaya melalui sumbangan-sumbangan lain. Saya menggunakan kesempatan ini untuk menyerukan kepada seluruh rakyat Timor-Leste yang punya bahan-bahan yang berhubungan dengan periode 1974 – 1999, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menyumbangkan arsipnya, yang asli maupun salinannya, kepada pusat penyimpanan nasional ini. Dan keempat, harus dilakukan segala kehati-hatian untuk menjamin bahwa akses ke pernyataan yang dipercayakan oleh para korban kepada CAVR terjaga dan bahwa kerahasiaan bukti dan hak serta keamanan para pemberi pernyataan dihormati sepenuhnya. CAVR telah melakukan segala usaha, bekerjasama dengan Parlemen Nasional dan Kementerian Kehakiman, untuk menjamin bahwa hal ini dijamin setelah penutupan CAVR.

Masa depan

Ini membawa saya pada butir terakhir yang berhubungan dengan isi Laporan. Sebagian besar kerja CAVR merupakan awal yang baik, tetapi masih banyak yang harus dilakukan—di bidang rekonsiliasi, pencarian kebenaran, pemulihan, dan keadilan.

Kami yakin bahwa CAVR telah menyumbang pada stabilisasi banyak komunitas lokal melalui program rekonsiliasinya. Tapi, banyak kasus belum ditangani dan perlu dikembangkan dan cara-cara kreatif menggunakan metodologi CAVR sehingga proses yang unik ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi konflik di masa mendatang. Di bidang pencarian kebenaran, CAVR tidak berhasil memberikan jawaban definitif pada banyak masalah. Diharapkan bahwa proses pengungkapan kebenaran bisa berlanjut, berdasarkan bukti yang telah dikumpulkannya dan pengungkapan informasi baru melalui penelitian lanjutan. Juga masih harus dilakukan kerja untuk menyebarluaskan Laporan ini dan untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasinya. Ini adalah hal yang belum selesai yang sangat mutlak bagi proses pemulihan, pendalaman budaya hak asasi manusia, dan kekuasaan hukum, serta mengambil pelajaran secara nasional maupun internasional. Agar hal ini bisa terjadi, diperlukan suatu lembaga tindak lanjut yang efektif. Lembaga ini juga diperlukan untuk menjamin keamanan, pengelolaan yang profesional, dan pengembangan arsip-arsip CAVR.

Penghargaan

Setelah tampil menonjol di seluruh bagian negeri dan melalui audiensi publik yang disiarkan ke seluruh negeri, CAVR tampil tidak menonjol selama 12 bulan lebih. Sebagian pihak mungkin bertanya-tanya jangan-jangan kami tertidur ketika bekerja! Kenyataannya ialah bahwa kami terlibat penuh dalam menyelesaikan tugas kedua mandat kami pada bulan-bulan terakhir—pencarian kebenaran—dan ini terbukti merupakan kegiatan yang amat sangat sulit, menuntut banyak usaha, dan memakan waktu.

Karena itu saya ingin memulai daftar penghargaan ini dengan mengakui pengertian dan dukungan yang kami dapatkan dari Parlemen Nasional, khususnya yang memberi kami tambahan waktu pada tiga kali kesempatan untuk melengkapi pekerjaan kami. Terimakasih kepada Presiden Francisco Guterres Lú-Olo dan semua rekan Parlemerter Anda.

Para pakar mengatakan bahwa salah satu syarat untuk keberhasilan komisi kebenaran adalah tingkat dukungan atau penerimaan resmi. CAVR telah memenuhi syarat ini. Sebagai Komisaris yang berasal dari generasi yang relatif muda pasca-1975, kami sekarang bisa mengakui bahwa kami merasa gentar harus menangani masalah-masalah yang pelaku-pelaku kuncinya adalah para pemimpin terhormat dari generasi yang lebih tua. Ternyata kami tidak perlu cemas dan kami merasa banyak berutang pada para pemimpin politik kita, yang pengertian dan dukungannya telah sangat berarti bagi kami.

Bapak Presiden, Anda telah lama menjadi penganjur rekonsiliasi, dan pendekatan CAVR banyak mengambil dari semangat inklusif yang merupakan ciri kepemimpinan Anda. Kami sangat menghargai dukungan Anda saat pada banyak kesempatan kami meminta nasihat Anda. Terimakasih juga atas pembagian pengetahuan Anda kepada Komisi, kesaksian publik Anda, dan bantuan Anda mencarikan dana. Kami juga berutang budi kepada Anda, Perdana Menteri. Dukungan publik yang tegas dari

Anda kepada CAVR dari awal, penghormatan total pada independensi Komisi, dan di tengah-tengah banyak tugas Anda, Anda meluangkan waktu membantu pencarian dana, memberikan wawancara, dan memberikan kesaksian publik. Hal yang sama juga disampaikan kepada Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Dr José Ramos-Horta, yang selain bantuan-bantuan lain, menggunakan aksesnya pada fora internasional untuk berbicara untuk kepentingan CAVR. Karena dukungan dari mereka, yang juga banyak diberikan oleh partai-partai politik, komunitas keagamaan, para Uskup Katolik, dan masyarakat sipil, CAVR bisa memusatkan perhatian pada kerjanya yang sensitif, bebas dari kontroversi dan keharusan memberikan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu.

Kami juga berterimakasih kepada Ketua Pengadilan Banding, Dr Claudio Ximenes, dan Jaksa Agung Dr Longuinhos Monteiro, atas dukungan pribadi dan kelembagaan mereka. Kedua lembaga itu merupakan unsur penting dalam keberhasilan Proses Rekonsiliasi Komunitas CAVR.

CAVR juga mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat internasional, khususnya dalam bentuk hibah uang dan sumberdaya manusia. Karena keadaan ekonomi Timor-Leste, semua dana untuk CAVR harus diperoleh dari luar. Lebih daripada 25 pemerintah dan badan dana menanggapi permintaan kami dan memberikan dana yang diperlukan untuk merehabilitasi dan mengelola enam kantor, menempatkan hampir 300 staf di lapangan, memberikan transportasi, peralatan, dan sumberdaya yang diperlukan untuk kerja kami dan memberikan pakar penasihat mengenai berbagai bidang kepada CAVR. Nama-nama dan sumbangan-sumbangan donor-donor ini bisa dibaca pada Laporan. Atas nama semua rekan saya di CAVR, saya menyampaikan terimakasih kepada semua yang telah dengan sangat jujur mengakui bahwa pembangunan perdamaian adalah dasar bagi perkembangan yang berkelanjutan dan atas dukungan praktis dan moral yang tulus selama lima tahun ini.

Terakhir, tetapi bukan yang paling tidak penting, saya mengucapkan terimakasih kepada enam Komisaris Nasional dan 28 Komisaris Regional dan semua staf yang mengagumkan atas sumbangan mereka. Lebih daripada 500 orang termasuk para Komisaris, staf nasional dan internasional, dan sukarelawan jangka pendek telah bekerja di atau untuk CAVR sejak 2001. CAVR adalah suatu karya agung yang ambisius serta petualangan ke wilayah tak dikenal bagi kita semua. Lebih daripada satu kali ia mengancam menenggelamkan kita secara emosional dan organisasional. Kerja ini terutama sangat intens dan melelahkan dalam 12 bulan terakhir. Saya tahu bahwa bekerja di CAVR adalah pengalaman yang bermakna unik dan mendalam bagi semua rekan saya, para Komisaris dan staf. Meskipun demikian, Timor-Leste berutang besar pada mereka semua atas sumbangan yang mereka berikan untuk kedamaian, persatuan, dan hak asasi manusia di negara baru kita.

Penutup

Sebelum menyampaikan Laporan kami, saya hanya punya satu hal lagi untuk dikatakan sebagai penutup. Keinginan paling dalam dari semua pihak di CAVR ialah

agar Laporan ini diterima dengan semangat yang sama ketika ia ditulis—dengan keterbukaan, kejujuran, kasih yang mendalam kepada orang-orang yang telah menderita, komitmen yang nyaris fanatik pada tiadanya kekerasan, dan keteguhan untuk tidak pernah membiarkan apa yang telah terjadi yang ditulis dalam Laporan ini terjadi lagi pada rakyat dan negeri kita yang indah.

Atas nama para rekan Komisararis saya dan semua staf CAVR, sekarang merupakan kehormatan dan keistimewaan bagi saya untuk menyerahkan Laporan CAVR kepada Yang Mulia Bapak Presiden.

Surat penyerahan Laporan dari Komisaris Nasional CAVR

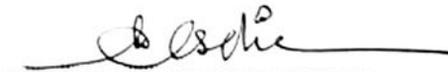
O Relatório da Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste (CAVR) foi apresentada ao S.E. Presidente da República, Kay Rala Xanana Gusmão, no dia 31 de Outubro de 2005.*



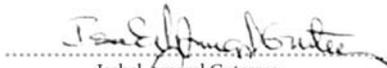
.....
Añiceto Guterres Lopes, Chairperson



.....
Fr. Jovito do Rêgo de Jesus Araújo, Vice-Chairperson



.....
Maria Olandina Isabel Caeiro Alves



.....
Isabel Amral Guterres



.....
José Estevão Soares



.....
Rev. Agostinho de Vasconcelos



.....
Jacinto das Neves Palmundo Alves

* Terjemahan: Laporan CAVR diserahkan kepada Presiden Republik Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, 31 Oktober 2005.



SIMU MALU. LIA LOS NO REKONSILIASAUN
TIMOR LORO SAE
SIMU POSSE BA KOMISARIS NASIONAL
21 JANEIRO 2002



Chega!

Bagian

1.

Pendahuluan

Bagian 1. Pendahuluan

7 | Latar belakang Komisi

- 9 | Dari kolonialisme ke pendudukan militer
- 13 | Pertemuan kembali: rekonsiliasi
- 15 | Asas penyusunan Laporan
- 15 | Kebenaran

17 | Asal-mula Komisi

- 17 | Lokakarya dan Kongres CNRT
- 18 | Hasil konsultasi publik Komite Pengarah
 - 18 | Pencarian Kebenaran dan Keadilan
 - 19 | Rekonsiliasi
 - 20 | Mendukung para korban
- 20 | Memilih nama Komisi
- 21 | Regulasi Nomor 10/2001, Pembentukan Komisi
- 22 | Kantor Interim
- 22 | Dewan Penasihat CAVR

23 | Pembentukan Komisi

- 23 | Komisaris Nasional
- 24 | **Boks: Profil Komisaris Nasional**
- 27 | Prinsip-prinsip dan misi Komisi
- 28 | Komisaris Regional

29 | Hal-hal dan tantangan operasional

- 29 | Tantangan praktis bagi kerja Komisi
- 30 | Tantangan bahasa
- 31 | Pendekatan terpadu berbasis komunitas
- 32 | **Boks: Proyek percontohan mengenai pencarian kebenaran, rekonsiliasi komunitas, dan dukungan korban**
- 35 | Rencana strategis

37 | Program-program inti

- 37 | Pencarian kebenaran
 - 37 | Pengambilan pernyataan dan pengolahan data
 - 39 | Penelitian
 - 40 | Audiensi publik
 - 40 | **Audiensi korban**
 - 41 | **Audiensi publik nasional**

- 42 | Penelitian angka kematian
- 43 | Submisi
- 44 | Sumber-sumber informasi

- 46 | Rekonsiliasi Komunitas
- 48 | Penerimaan dan dukungan korban
- 49 | Laporan akhir
- 51 | Arsip
- 52 | Kewajiban Komisi terhadap para peserta dalam program-program intinya
 - 52 | Kerahasiaan
 - 52 | Hak-hak para deponen dalam PRK
 - 53 | **Perlindungan saksi**

53 | Kantor Nasional dan Regional serta masalah kepegawaian

- 53 | Kantor Nasional

53 | **Boks:** Dari penjara menjadi pusat memorial untuk korban, Hak Asasi Manusia, dan Rekonsiliasi

- 56 | CAVR sebagai institusi pembelajaran
- 56 | Pengembangan institusi dan pembangunan kapasitas
- 57 | Gender dan kepegawaian
- 58 | Kantor Regional dan Tim Distrik
- 59 | Gender dalam kerja distrik
- 60 | Peran staf internasional dalam Komisi

61 | Manajemen dan administrasi

- 61 | Struktur manajemen
- 61 | Administrasi
- 62 | Keuangan
- 62 | Pengurangan staf dan restrukturisasi

63 | Membangun hubungan untuk masa depan

- 63 | Hubungan langsung
- 65 | **Boks:** Nota Kesepahaman dengan Kantor Kejaksaan Agung
- 65 | Kampanye media dan informasi
- 66 | Komunitas internasional
- 67 | Penjangkauan komunitas dan informasi publik

Daftar tabel:

- 68 | **Tonggak-tonggak sejarah Komisi**

Pendahuluan

1

Latar belakang Komisi

1. Perjuangan panjang rakyat Timor-Leste untuk merebut kebebasan dan masa depannya sebagai bangsa mencapai titik yang menentukan pada 1999. Setelah ratusan tahun kolonialisme Portugis dan 24 tahun pendudukan asing, kita akhirnya bisa mengungkapkan keinginan kita untuk hidup sebagai bangsa yang bebas dan merdeka di negara yang bebas dan merdeka, ketika masyarakat internasional pada akhirnya mendukung hak dasar kita atas penentuan nasib sendiri. Penindasan dalam masa kolonialisme yang panjang dan kekerasan menggemparkan sepanjang masa pendudukan militer asing berpuncak pada suatu aksi kekerasan penghabisan terhadap rakyat Timor-Leste pada September dan Oktober 1999, yang meninggalkan negeri kita dalam keadaan porak-poranda setelah kepergian militer itu.
2. Tanda-tanda kehancuran tampak jelas bagi semua pihak. Kota-kota dan desa-desa yang hangus terbakar, gedung-gedung dengan bercak-bercak darah yang menjadi tempat pembantaian, seluruh wilayah hampir kosong dari penduduknya yang melarikan diri atau dipaksa meninggalkan rumah mereka. Ketika rakyat perlahan-lahan kembali ke rumah untuk mencari yang hidup dan berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan, serta ketika masyarakat internasional datang dengan bantuan darurat, perlahan-lahan luka lama dari konflik-konflik politik yang berlangsung lama menjadi semakin tampak nyata.
3. Bagi orang kebanyakan, warisan dari konflik selama 24 tahun itu sangat besar dan memiliki banyak segi. Di tengah puing-puing kehancuran dari masa akhir 1999, sangat jelas bahwa perlu diambil langkah untuk menangani banyak unsur dari warisan ini, untuk membantu rakyat membangun kembali kehidupan mereka, dan menjadikan hak asasi manusia dan penegakan hukum sebagai asas-asas yang mengatur perikehidupan negara baru ini.
4. Pada 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan misi UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor, Pemerintahan Transisi PBB di Timor-Leste), dengan mandat untuk menjadi pemerintah peralihan di wilayah ini dan mempersiapkannya untuk kemerdekaan. Ketika

kebutuhan-kebutuhan awal krisis kemanusiaan berkurang, perhatian dialihkan pada pembentukan lembaga-lembaga yang sangat mendasar. Ini meliputi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan keadilan, termasuk untuk pelanggaran-pelanggaran di masa lalu.

5. Keprihatinan pertama dari banyak aktivis hak asasi manusia Timor-Leste adalah bagaimana membantu mengatasi keadaan darurat kemanusiaan yang ditimbulkan oleh kekerasan September - Oktober. Ketika program-program bantuan kemanusiaan telah dijalankan, pada tahun 2000 para aktivis beralih ke masalah kejahatan masa lalu dan warisan konflik yang berlangsung lama. Ada kekhawatiran mengenai kemungkinan berkobarnya kembali kekerasan, khususnya dalam konteks impunitas nyaris penuh yang dinikmati oleh para pelaku kejahatan; dan mengenai masalah yang berjangka lebih panjang tentang bagaimana mengembangkan budaya penghormatan hak asasi manusia dan penegakan hukum dalam masyarakat yang telah lama mendambakannya.

6. Pada akhir 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan Komisi Penyelidikan untuk menyelidiki kejadian-kejadian yang belum lama berlangsung dan untuk memberikan rekomendasi mengenai bagaimana pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai ini dimintai pertanggungjawaban. Komisi ini merekomendasikan pembentukan Mahkamah Pengadilan Internasional untuk mengadili kasus-kasus kejahatan 1999. Tapi, PBB malah menyelenggarakan proses Peradilan Kejahatan Berat di Timor-Leste dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperlihatkan kesungguhannya pada penegakan hukum dengan menggunakan sistem peradilan sendiri untuk mengadili orang-orang yang berada di Indonesia. Aktivis-aktivis hak asasi manusia Timor-Leste, yang menyadari bahwa dampak dari konflik pada masyarakat Timor-Leste tidak terbatas pada kejadian-kejadian tahun 1999, mengupayakan langkah-langkah lain untuk melengkapi proses ini.

7. Pada 7 Maret 2000 konferensi Comissão Política Nacional (Komisi Politik Nasional, CPN) CNRT memutuskan agar CNRT (Conselho Nacional de Resistência Timorese, Dewan Nasional Resistansi Rakyat Timor) membentuk komisi rekonsiliasi. Pada Juni 2000 dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Rekonsiliasi CNRT, dengan dukungan dari Universitas Uppsala dan Unit Hak Asasi Manusia UNTAET, dan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi politik, hak asasi manusia, dan Gereja Katolik, gagasan mengenai komisi kebenaran dan rekonsiliasi dibahas lebih lanjut. Kelompok ini selanjutnya mengajukan gagasan ini kepada Kongres Nasional CNRT pada Agustus 2000, suatu pertemuan bersejarah untuk merumuskan visi bagi Timor-Leste yang baru merdeka. Kongres ini mengesahkan gagasan mengenai komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta menetapkan panitia pengarah dengan tugas menyelenggarakan konsultasi untuk menentukan apakah gagasan ini diterima oleh masyarakat Timor-Leste yang lebih luas. Inilah awal dari CAVR.

Dari kolonialisme ke pendudukan militer

8. Terletak sekitar 500 kilometer di utara Australia, Timor-Leste menyambungkan Asia dan Pasifik, dan hal ini bisa dilihat pada keanekaragaman budaya dan bahasa negeri ini. Timor dulu dijajah oleh bangsa Portugis, yang kekuasaannya di kawasan ini merosot menghadapi pertumbuhan kekuatan Belanda dan Inggris. Selama beberapa abad selanjutnya Timor Portugis menjadi semakin terisolasi, satu-satunya tempat berpijak Portugal di tepian Asia Tenggara.

9. Pijakan Portugis di Timor sangat lemah sampai abad ke-19, karena sedikit yang dilakukannya untuk menegakkan kekuasaannya atas mayoritas orang Timor-Leste yang tinggal di pedalaman yang bergunung-gunung. Pada pertengahan abad ke-19, Portugal memulai penanaman kopi secara paksa sebagai tanaman penghasil uang, yang bersama dengan pemberlakuan berbagai jenis pajak membuat kekuasaan mereka meningkat atas kehidupan sehari-hari rakyat Timor. Pemberontakan-pemberontakan meledak sampai memasuki awal abad ke-20, ketika orang-orang Portugis memadamkan dengan keras pemberontakan yang dipimpin oleh Dom Boaventura dari Manufahi, yang mendapatkan dukungan luas dari seluruh wilayah. Portugal berusaha mempertahankan kekuasaannya melalui sistem pemerintahan yang menguntungkan pemimpin-pemimpin setempat tertentu dengan merugikan yang lain. Hasilnya adalah suatu masyarakat yang kurang memiliki jalinan erat yang merupakan syarat bagi perkembangan perasaan kebangsaan.

10. Warisan kolonial ini diperparah oleh kenyataan bahwa untuk hampir seluruh masa abad ke-20 Portugal sendiri berada di bawah kekuasaan rezim otoriter Salazar dan penggantinya Marcello Caetano. Sejak akhir dasawarsa 1920-an sampai Revolusi Anyelir April 1974, kebebasan politik di Portugal sangat dibatasi. Portugal menindas semua keinginan untuk merdeka di tanah-tanah jajahannya, menyebut semuanya sebagai bagian tak terpisahkan dari Portugal bahkan setelah PBB pada 1960 menyatakan wilayah-wilayah ini sebagai wilayah tanpa pemerintahan sendiri. Portugal adalah negara Eropa-penjajah terakhir yang melakukan dekolonisasi, mengabaikan gelombang dekolonisasi yang dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Baru setelah perang-perang pembebasan yang berkobar di koloni-koloni Portugal di Afrika meyakinkan banyak orang Portugis bahwa imperium itu tidak bisa dipertahankan, perubahan datang dengan pecahnya Revolusi Anyelir pada 15 April 1974.

11. Janji dekolonisasi adalah salah satu pelek perjuangan revolusi ini di Lisabon. Tapi, bagi Portugal, dekolonisasi terutama berarti segera keluar dari perang melawan gerakan pembebasan di koloni-koloni Afrika mereka. Koloni mereka di Asia, Timor, adalah kasus khusus yang dengan mudah terabaikan. Selama bulan-bulan selanjutnya, politik Portugis terhadap Timor mengidap kekurangan perhatian dan perencanaan, diperparah oleh pergantian pemerintah yang terus-menerus di Lisabon. Di Timor, Revolusi Anyelir membuka jalan bagi cita-cita kebebasan di kalangan penduduk yang aktif berpolitik, yang sebagian besar adalah orang muda dan tidak berpengalaman. Perkumpulan-perkumpulan politik segera dibentuk, dengan dua yang utama, Associação Social Democrata Timorensis (Perkumpulan Sosial Demokrat Timor, ASDT), yang kemudian diubah namanya menjadi Frente

Revolucionária de Timor-Leste Independente (Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Leste, Fretilin), dan União Democrática Timorensis (Persatuan Demokratik Timor, UDT), menginginkan kemerdekaan wilayah ini.

12. Masa itu adalah titik tertinggi Perang Dingin. Pada 1975 setelah Revolusi Anyelir, perang di Vietnam mencapai titik akhirnya dengan kemenangan Vietnam Utara yang komunis atas Vietnam Selatan dan Amerika Serikat pelindungnya. Di tengah-tengah ketakutan Amerika Serikat dan Barat umumnya akan “dampak domino” yang bisa mengubah lebih banyak lagi negara Asia Tenggara menjadi komunis, rezim militer Presiden Soeharto yang sangat anti-komunis dipandang sebagai satu benteng stabilitas bagi kawasan ini.

13. Harapan bahwa dekolonisasi di Timor akan berlangsung lancar dihambat oleh pengabaian Portugis, campur tangan Indonesia yang didukung oleh sekutu-sekutu penting Baratnya, Amerika Serikat dan Australia, dan rendahnya pengalaman politik para pemimpin partai-partai yang baru dibentuk, yang kebanyakan adalah orang muda dan dengan wacana politik yang sangat diwarnai retorika mengenai kekerasan dan serangan pribadi, bukannya pertukaran gagasan.

14. Pada 11 Agustus 1975, partai kanan-tengah UDT melancarkan gerakan bersenjata di Dili. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kontrol atas wilayah ini, menuntut pengusiran orang-orang Portugis dan Timor-Leste yang radikal, dan dengan demikian menunjukkan kepada Indonesia bahwa Timor tidak sedang menjadi ladang pembibitan komunisme. Suasana yang telah rentan ini meledak menjadi kekerasan yang melanda seluruh distrik Timor. Dalam waktu sepuluh hari, partai sayap kiri Fretilin menanggapi dengan kebangkitan bersenjata umum.

15. Perang saudara yang singkat ini selesai pada awal September, tetapi telah mengubah keadaan tanpa bisa dikembalikan lagi. Pertempuran yang terjadi memangsa nyawa 3.000 orang dan meninggalkan luka yang dalam dan lama. Pada akhir Agustus, pemerintah kolonial Portugis meninggalkan wilayah utama menuju Pulau Ataúro, tanpa pernah kembali. Para pemimpin dan anggota UDT, dan tiga partai kecil yang lain, Associação Popular Democrática Timorensis (Perkumpulan Kerakyatan Demokratik Timor, Apodeti), Klibur Oan Timor Aswain (Perkumpulan Kesatria Putra Timor, KOTA), dan Trabalhista (Buruh), lari melintasi perbatasan memasuki Timor Barat Indonesia, dan bersekutu dengan tujuan Indonesia.

16. Angkatan bersenjata Indonesia telah melancarkan operasi tertutup di Timor Portugis sejak pertengahan 1974, dan memberi anggota-anggota Apodeti latihan militer di Timor Barat sejak Desember 1974. Mulai September 1975, tentara Indonesia mengadakan operasi lintas-batas memasuki Timor Portugis dengan tujuan menghancurkan posisi pemerintah *de facto* Fretilin yang sedang menghadapi kesulitan. Pada Oktober 1975, mereka meningkatkan operasi-operasi ini dengan melancarkan serangan gabungan besar-besaran dari udara, laut, dan darat yang menghasilkan pendudukan kota-kota kunci di Distrik Bobonaro yang terletak di bagian barat negeri.

17. Fretilin, yang ingin mengembalikan proses dekolonisasi pada jalurnya, mengusahakan kembalinya pemerintah Portugis. Gubernur Mário Lemos Pires, yang tidak mendapatkan dukungan atau pengarahannya dari Lisbon, menolak kembali atau berunding dengan Fretilin karena pengakuan Fretilin sebagai wakil sah satu-satunya rakyat Timor-Leste. Untuk mencegah agresi militer dari Indonesia serta mendapatkan pengakuan dan bantuan internasional, Fretilin mengumumkan kemerdekaan pada 28 November 1975.

18. Empat partai politik lain Timor-Leste, di bawah tekanan dari tentara Indonesia, menandatangani satu deklarasi, Deklarasi Balibó, di Bali pada hari berikutnya, yang mendeklarasikan integrasi Timor Portugis ke dalam negara Indonesia. Indonesia melancarkan invasi skala penuh terhadap Timor-Leste pada 7 Desember 1975. Fretilin dan sayap bersenjata, Falintil (Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste), mundur ke pedalaman bersama puluhan ribu penduduk sipil. Maka dimulailah perang yang berlangsung selama 24 tahun, yang melalui berbagai tahap militer dan politik.

19. Indonesia berusaha mengesahkan pencaplokannya atas Timor-Leste. Majelis Rakyat Timor Timur, yang terdiri atas orang-orang Timor-Leste yang diseleksi dengan seksama, mengadakan rapat di Dili pada Mei 1976 dan, dengan mengutip Deklarasi Balibó, secara aklamasi mengesahkan petisi meminta integrasi. Atas dasar tindakan yang dilakukan sebagai penentuan nasib sendiri ini, pada Juli 1976 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan undang-undang yang menyatakan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah mengakui proses ini sebagai tindakan penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste yang diakui internasional. Dewan Keamanan PBB pada Desember 1975 dan April 1976 mengutuk invasi dan menyerukan penarikan pasukan tentara Indonesia. Majelis Umum PBB mengeluarkan mosi mendukung penentuan nasib sendiri untuk Timor-Leste setiap tahun sampai 1982, ketika masalah ini dirujuk kepada jasa baik Sekretaris Jenderal. Timor-Leste tetap berada dalam agenda PBB sepanjang masa pendudukan, terdaftar sebagai satu wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri di bawah administrasi Portugal.

20. Dalam kenyataan, anggota-anggota penting PBB tidak banyak berbuat untuk menentang pencaplokan Indonesia ataupun cara-cara kekerasan yang dilakukan untuk memperkuat pencaplokan itu. Kebanyakan negara siap bertoleransi terhadap Indonesia sebagai satu negara besar di kawasan Asia Tenggara. Keadaan di Timor-Leste sangat tidak dimengerti. Pemerintah negara-negara yang bersahabat dengan Indonesia mendukung versi Indonesia mengenai apa yang terjadi di sana. Terkucil di kawasannya sendiri di masa kolonialisme Portugis, Timor-Leste menjadi wilayah tertutup dalam 13 tahun pertama pendudukan ketika tentara Indonesia menggunakan setiap cara yang bisa dilakukannya untuk menundukkan rakyat Timor-Leste. PBB terhalangi upayanya untuk memasuki Timor-Leste untuk menilai keadaan, bantuan asing diblokade, dan diplomat serta media asing hanya diberi izin untuk melakukan kunjungan dalam jumlah terbatas dan dikontrol ketat. Orang Timor-Leste di pengasingan bekerja keras bersama masyarakat sipil internasional untuk menarik

perhatian kepada penderitaan rakyat Timor-Leste, tetapi dengan sarana yang terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara yang mendukung Indonesia.

21. Perang mencapai setiap desa di Timor-Leste dan berpengaruh mendalam pada kehidupan seluruh rakyat Timor-Leste. Terputus dari dunia luar dan tanpa perlindungan kelembagaan apapun, penduduk sipil biasa secara besar-besaran menderita karena berbagai serangan tanpa ampun dan kekejaman militer Indonesia yang tanpa pandang bulu, khususnya pada tahun-tahun awal pendudukan. Orang yang dipandang sebagai lawan politik pendudukan diperlakukan dengan sangat kejam. Khususnya pada tahun-tahun awal pendudukan, penduduk sipil biasa juga bisa mengalami perlakuan yang kejam kalau mereka bertentangan dengan gagasan luas Resistansi mengenai penyimpangan ideologis.

22. Dalam seluruh masa itu pemimpin militer dan politik Indonesia mengklaim bahwa kegiatan sejumlah kecil “pengacau keamanan” telah tamat, perang telah selesai, dan bahwa laporan-laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia itu palsu. Sekutu-sekutu asing Indonesia terlibat mendukung kebohongan-kebohongan ini, yang dengan demikian berarti memperkuat impunitas yang diperoleh militer Indonesia di dalam negeri dan memungkinkannya melanjutkan operasi-operasi biadabnya menundukkan rakyat Timor-Leste tanpa hambatan.

23. Sepanjang masa pendudukan, sifat konflik beberapa kali berubah. Dasawarsa 1970-an adalah masa operasi-operasi militer besar yang bertujuan menghancurkan Resistansi bersenjata yang dipimpin Fretilin. Penduduk sipil dalam jumlah sangat besar tinggal di pedalaman bersama Resistansi, dan secara langsung menderita karena operasi-operasi militer tersebut. Pada akhir dasawarsa 1970-an, Resistansi bersenjata hancur, dan strateginya mengenai basis tetap, di mana penduduk sipil berperan penting, berakhir. Ketika penduduk sipil terpaksa keluar dari pedalaman, militer Indonesia melancarkan strategi memisahkan penduduk sipil dari Resistansi bersenjata dengan menempatkan puluhan ribu penduduk sipil yang menyerah di kamp-kamp tahanan dan desa-desa pemukiman dengan akibat malapetaka bagi rakyat Timor-Leste, yang menderita kelaparan luar biasa pada akhir dasawarsa 1970-an dan awal dasawarsa 1980-an.

24. Resistansi disusun kembali pada dasawarsa 1980-an menjadi kekuatan gerilya, yang didukung oleh gerakan bawahan yang sedang tumbuh di kota-kota dan desa-desa. Tentara Indonesia memperluas jangkauan teritorialnya ke semua desa di Timor-Leste, yang mencakup kehadiran intelijen dan kesatuan-kesatuan paramiliter yang mencengkeram yang kebanyakan diawasi oleh orang Timor-Leste. Militerisasi masyarakat Timor-Leste ini sangat meluas dan berdampak sangat menghalangi seluruh jenis hak rakyat Timor-Leste yang diakui secara internasional, mulai dari hak politik dan sipil sampai hak ekonomi, sosial, dan budaya.

25. Pada akhir dasawarsa 1980-an, Indonesia mengklaim telah “menormalkan” Provinsi Timor Timur, dan mencabut sebagian larangan memasuki wilayah ini. Sebelumnya, pada awal 1980-an orang-orang muda mulai memasuki pendidikan universitas di Indonesia, dan gerakan bawahan semakin dijalankan oleh

generasi baru ini. Ketika Perang Dingin berakhir pada 1989, dan ketika orang asing sedikit-sedikit memasuki Provinsi Timor Timur yang baru dibuka, generasi muda ini berada di garis depan strategi baru Resistansi, di mana demonstrasi melawan pendudukan menjadi salah satu unsur intinya. Tanggapan Indonesia keras dan tak kenal kasihan, dan pada 1991 peristiwa terkenal Pembantaian Santa Cruz terhadap orang-orang muda oleh pasukan keamanan Indonesia terjadi di Dili. Berbeda dengan pembantaian-pembantaian sebelumnya, pembantaian ini difilmkan oleh seorang pembuat film asing dan gambar-gambar tentang kekejaman itu mencapai dunia luar. Ini berdampak besar pada pemahaman seluruh dunia mengenai keadaan di Timor-Leste, dan mendorong bangkitnya kembali upaya internasional untuk mencari satu penyelesaian bagi “persoalan Timor-Leste.”

26. Dengan bangkitnya kembali perhatian pada Timor-Leste, dan perubahan wawasan dalam pandangan politik global akibat berakhirnya Perang Dingin, Indonesia menghadapi tekanan yang semakin berat. Tapi, Presiden Soeharto tetap merupakan sekutu favorit Barat serta kekuasaan di tingkat regional, dan baru sesudah ia jatuh dari kekuasaan pada 1998 dimungkinkan terjadinya perubahan nyata. Penserikatan Bangsa-Bangsa, yang tetap menangani masalah ini selama pendudukan, meningkatkan kegiatannya dan akhirnya memperantarai dipacainya Kesepakatan 5 Mei 1999 yang menghasilkan Jajak Pendapat pada 30 Agustus 1999, saat rakyat Timor-Leste memilih kemerdekaan.

27. Sementara masyarakat internasional akhirnya mendukung hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dengan mendukung Jajak Pendapat, sekali lagi mereka gagal memahami hakikat sebenarnya dari pendudukan Indonesia. Tanggung jawab atas keamanan untuk Jajak Pendapat diserahkan kepada kepolisian Indonesia yang dikenal tunduk pada militer Indonesia, yang tidak hanya terus ditugaskan di wilayah ini tetapi juga dengan terang-terangan menumbuhkan milisi Timor-Leste sebagai instrumen dari strategi yang dimaksudkan untuk menjamin kemenangan kekuatan pro-integrasi. Akibatnya sudah bisa dibayangkan sebelumnya. Rakyat Timor-Leste menolak tunduk pada ancaman, intimidasi, dan kekerasan; mereka memilih kemerdekaan. Ketika hasil pemungutan suara diumumkan, militer Indonesia dan milisinya melancarkan pembalasan yang telah mereka ancamkan, dengan hasil malapetaka. Tapi, kali ini banyak pemerintah tidak mampu mengabaikan kontras antara keberanian luarbiasa dan martabat yang diperlihatkan oleh para pemilih Timor-Leste dan penghukuman yang luarbiasa kejam yang diberikan oleh TNI serta mitra Timor-Lestinya.

Pertemuan kembali: rekonsiliasi

28. Sejak awal proses dekolonisasi di Timor-Leste, ketika berbagai perkumpulan politik dibentuk dan muncul banyak perbedaan, ada upaya-upaya untuk menjembatani beragam perbedaan ini dan bekerjasama untuk kepentingan nasional yang lebih luas. Ketika para anggota berbagai partai politik utama saling menyerang secara lisan melalui siaran radio, sebagian lain yang melihat adanya bahaya, mengadakan pertemuan untuk merundingkan koalisi yang berumur pendek antara

UDT dan Fretilin. Ketika persekutuan ini terancam pecah, beberapa anggota dari kedua partai itu berusaha keras untuk membuatnya bertahan. Komisi mendapatkan keterangan bahwa bahkan selama Agustus - September 1975 ketika harapan akan perujukan terburu-buru dihancurkan oleh gerakan bersenjata UDT dan “perang saudara” yang tanpa terduga dikobarkannya, beberapa orang berupaya membuka dialog antara berbagai partai yang bertikai. Dalam bulan-bulan awal setelah invasi, ketika makna invasi yang sejati menjadi nyata bagi banyak orang Timor-Leste pendukungnya, Komisi juga mendapatkan keterangan mengenai adanya upaya diam-diam untuk rujuk antara pihak-pihak yang bermusuhan dalam perang saudara. Upaya-upaya awal ini gagal, tetapi mereka adalah pelopor dari pertumbuhan yang perlahan dan terus berlangsung dari suatu kesadaran nasional sejati yang ditempa dalam perjuangan panjang penentuan nasib sendiri.

29. Pada tahun-tahun pendudukan, Resistansi menjadi gerakan inklusif yang mencari cara untuk melibatkan orang Timor-Leste dari semua latar belakang politik dan orang-orang yang tanpa kesetiaan partai, termasuk anggota-anggota Gereja Katolik. Ketika Resistansi bergeser dari ideologi garis keras pada dasawarsa 1980-an dan mengambil strategi ‘persatuan nasional,’ gerakan ini merangkul semua pihak yang mendukung penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste. Sejak awal dasawarsa 1980-an, anggota-anggota UDT dan Fretilin di pengasingan mulai bekerja bersama untuk memengaruhi masyarakat internasional. Jalan ke perujukan tidaklah lancar—tapi tekad bersama pada kebebasan dan penentuan nasib sendiri memelihara upaya-upaya ini. Secara kelembagaan, Resistansi bergeser dari kepemimpinan partai tunggal Fretilin ke Conselho Revolucionário de Resistência Nacional (Dewan Revolusioner Resistansi Nasional, CRRN), kemudian Conselho Nacional de Resistência Maubere (Dewan Nasional Resistansi Maubere, CNRM), dan akhirnya Conselho Nacional de Resistência Timorese (Dewan Nasional Resistansi Rakyat Timor, CNRT)—dan setiap pergeseran menandai perluasan gerakan yang semakin besar untuk merangkul semua orang Timor-Leste yang bertekad sama. Generasi baru dasawarsa 1980-an dan 1990-an semakin mengadopsi perspektif yang nasionalis non-partisan mengenai perjuangan.

30. Lebih jauh lagi, Resistansi belajar tentang kekuatan dialog damai sebagai sarana menciptakan pemahaman bersama dan membangun kepercayaan. Pada 1983, gerakan Resistansi memperkenalkan rencana damainya yang pertama dan pada awal 1990-an CNRM menyebarkan rencana perdamaian yang mengusulkan dialog tanpa syarat untuk mencari penyelesaian konflik. Pada pertengahan dasawarsa 1990-an, di bawah naungan PBB, orang Timor-Leste dari latar belakang pro-kemerdekaan dan pro-integrasi berkumpul untuk melakukan serangkaian pertemuan yang disebut All-Inclusive Intra-East Timorese Dialogue (Dialog Antar-Orang Timor-Leste Mencakup Semua). Ketika perubahan benar-benar terlihat mungkin di Timor-Leste pada 1998, tapi terancam oleh kekerasan, para Uskup Katolik di Timor-Leste mempertemukan para pemimpin pro-kemerdekaan dan pro-integrasi dalam suatu pertemuan yang dikenal sebagai Dare I. Pertemuan kedua, disebut Dare II, diselenggarakan di Jakarta pada 1999, ketika kekerasan menghadapkan Jajak Pendapat pada risiko.

31. Bisa saja dikatakan bahwa kekerasan September-Oktober 1999 membuat gagalnya inisiatif-inisiatif tersebut. Tapi, pernyataan itu tidaklah tepat, karena selama 25 tahun ada orang-orang Timor-Leste yang berjuang untuk menemukan penyelesaian damai untuk mengatasi perpecahan, dan pada akhirnya, melalui Jajak Pendapat pada Agustus 1999, mayoritas sangat besar rakyat mendukung pendekatan ini. Kita perlu belajar dari ini, dan mengambil ilham dari upaya-upaya orang-orang Timor-Leste pembina perdamaian itu. Di masa depan, akan selalu ada perbedaan pandangan di antara kita dan dengan para tetangga kita. Kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, mengenai bagaimana kita mendekati perbedaan-perbedaan tersebut. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kita harus selalu memilih jalan damai. Dengan cara itu, kita dapat mengamankan masa depan kita, dan kita bisa menjadi cahaya terang bagi dunia. Pengetahuan kita mengenai masa lalu kita bisa membantu kita menciptakan masa depan yang damai.

Asas penyusunan Laporan

32. Bab-bab dalam Laporan ini disusun secara tematis. Ada sejumlah bab yang memberikan informasi latar yang mutlak bagi pemahaman tentang konteks dan sebab-sebab pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam seluruh periode yang menjadi mandat Komisi: misalnya, Bagian 3: Sejarah Konflik; Bagian 4: Rezim Pendudukan; Bagian 5: Gerakan Resistansi: Struktur dan Strategi. Bagian utama Laporan ini ada pada Bagian 7, yang disusun secara tematis ke dalam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia utama yang terjadi dalam periode mandat. Di dalam setiap bab dalam bagian ini, pelanggaran-pelanggaran dibahas dalam struktur yang membagi periode mandat menjadi tujuh tahap utama, yaitu:

- April 1974 - September 1975: konflik politik internal dan bersenjata
- September 1975 - Januari 1976: periode administrasi Fretilin, masa setelah konflik internal, dan penyusupan Indonesia
- Desember 1975, invasi penuh Indonesia
- 1976 - 1979: periode operasi-operasi besar militer Indonesia dan Resistansi bersenjata yang dipimpin oleh Fretilin
- 1980 - 1984: periode “konsolidasi” militer Indonesia dan pembangunan kembali Resistansi
- 1985-1998: periode “normalisasi”
- 1999: periode menuju dan setelah Jajak Pendapat 30 Agustus 1999

Kebenaran

33. Mandat Komisi adalah menetapkan kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste sepanjang 25 tahun periode mandatnya. Jangkauan mandat ini mencakup penentuan faktor-faktor seperti konteks, sebab, latar belakang, alasan, dan pandangan yang memicu terjadinya kekerasan, baik

berupa bagian dari pola pelanggaran yang sistematis, identitas orang-orang, pihak-pihak yang berwenang, lembaga-lembaga, dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam pelanggaran, dan apakah pelanggaran merupakan akibat dari perencanaan, kebijakan, atau pengesahan oleh pihak negara, kelompok-kelompok politik, kelompok-kelompok milisi, gerakan pembebasan atau kelompok-kelompok atau orang-orang lain.¹ Komisi juga diberi mandat untuk mempelajari peran faktor-faktor internal dan eksternal, dan menentukan pertanggungjawaban untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi (Regulasi 10/2001, Pasal 3: lihat Bagian 2: Mandat Komisi).

34. Komisi bukanlah pengadilan dan tidak membuat dakwaan-dakwaan terhadap orang-orang atau mengenai kasus-kasus perorangan. Tapi, kerja Komisi untuk menetapkan kebenaran telah melibatkan pengumpulan berbagai macam bahan yang merupakan bukti kuat mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam waktu yang menjadi mandatnya. Menurut mandat Komisi, kebenaran ini memiliki beberapa kegunaan. Misalnya:

- Memperjelas peristiwa-peristiwa yang sampai sekarang banyak tidak dilaporkan atau bahkan ditutup-tutupi;
- Mendorong penyelidikan lebih lanjut oleh berbagai negara, organisasi internasional, dan lain-lain yang bisa mengarah pada penuntutan hukum dan dengan demikian memajukan perjuangan melawan impunitas untuk kejahatan-kejahatan berat;
- Membantu korban memulihkan martabat mereka, melalui berbagi dengan bangsa dan masyarakat internasional kebenaran yang sampai sekarang ditindas dan dengan demikian tidak dimengerti atau mungkin tidak dipercayai;
- Memahami dengan lebih baik kekuatan-kekuatan yang telah membentuk masyarakat dan bangsa Timor-Leste, dan menarik pelajaran dari masa lalu yang bisa mengembangkan budaya perdamaian dan penghormatan pada hak asasi manusia dan penegakan hukum;
- Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mengenai masa lalu pada seluruh warganegara Timor-Leste, khususnya di kalangan orang muda dan generasi muda, sehingga dengan mengingat dan menghormati penderitaan rakyat kita selama tahun-tahun konflik, kita belajar menghargai tantangan-tantangan berat yang mereka hadapi, bagaimana mereka mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dan secara khusus menghargai orang-orang yang telah memberikan sumbangsih bagi kebebasan dan perdamaian abadi di negeri kita.

35. Kebenaran yang terkandung dalam Laporan ini banyak berasal dari pernyataan orang-orang yang secara langsung mengalami tahun-tahun konflik. Komisi memberikan arti penting khusus pada mendengarkan langsung orang-orang yang telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia sepanjang masa 25 tahun, yang kebanyakan belum berbicara di luar lingkaran kecil keluarga mereka.

Suara-suara yang banyak ini, dari seluruh wilayah negeri, telah memberi Timor-Leste harta yang tak bisa dinilai harganya. Mereka memberi tahu kita siapa kita, apa yang telah kita lalui, apa yang telah hilang dari kita, dan memperlihatkan nilai dari apa yang telah kita capai. Dari kisah-kisah saudara-saudara kita, kita belajar bahwa kemenangan bukanlah masalah sederhana pahlawan lawan penjahat; bahwa sejarah adalah lebih daripada sekadar daftar peristiwa besar atau riwayat hidup orang-orang besar. Pengalaman “orang biasa,” dari banyak orang yang telah mati atau yang masih hidup, memberi tahu kita dari mana asal kita dan membantu kita mengerti siapa kita kini. Dari kisah-kisah mereka, kita melihat dengan lebih jelas kedua ekstrem martabat manusia dan kemerosotan manusia yang terwujud di negeri ini selama 25 tahun. Kita harus belajar dari kedua sisi kisah manusia ini. Kita harus mengakui potensi kita untuk berada di kedua ekstrem tersebut, dan berusaha selalu memberikan yang terbaik dari kemanusiaan kita kepada hidup dan hubungan kita – keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita—setiap hari ketika kita membangun masa depan baru.

Asal-mula Komisi

Lokakarya dan Kongres CNRT

36. Pada Juni 2000, perwakilan masyarakat sipil Timor-Leste, Gereja Katolik, dan pemimpin masyarakat dengan Kantor Hak Asasi Manusia misi UNTAET menyelenggarakan lokakarya untuk membahas mekanisme peradilan transisi. Salah satu agendanya adalah mengkaji kelayakan pendirian sebuah komisi pencarian kebenaran bagi Timor-Leste. Lokakarya tersebut kemudian merekomendasikan untuk mengajukan proposal kepada Kongres Nasional pertama CNRT (Conselho Nacional da Resistência Timorense) pada Agustus, tentang pendirian komisi yang diberi mandat untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran di masa lalu serta mendorong rekonsiliasi.

37. Kongres tersebut dihadiri perwakilan konstituen distrik, subdistrik, dan desa berdasarkan jaringan CNRT. Semua faksi di Timor-Leste yang telah mendukung kemerdekaan, berdiskusi dan mengajukan kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan visi mengenai masa depan. Salah satu hasilnya adalah pengakuan resmi bahwa kolonisasi dan pendudukan militer yang berkepanjangan telah mengakibatkan kerusakan serius pada jalinan sosial dan identitas budaya bangsa ini. Komisi III Kongres ini, yang kewenangannya mencakup, antara lain, pembangunan sosio-kultural, mencatat bahwa di masa mendatang, kebijakan-kebijakan nasional tentang pembangunan sosial dan budaya harus “diarahkan kepada pembentukan masyarakat Timor-Leste yang didasarkan pada nilai-nilai universal, yang akan membawa pada terbentuknya masyarakat yang modern, lebih bermartabat, lebih manusiawi, dan adil.”²

38. Kongres CNRT menetapkan visi rekonsiliasi sebagai berikut:

Rekonsiliasi adalah sebuah proses, yang mengakui kesalahan masa lalu termasuk penyesalan dan pemberian maaf, sebagai hasil dari jalan yang tidak terpisahkan dari proses pencapaian keadilan; rekonsiliasi adalah juga sebuah proses yang harus melibatkan Rakyat Timor-Leste, sehingga lingkaran saling tuduh bisa diputus. Proses ini tidak bisa dipandang hanya sebagai upaya penyelesaian konflik, atau sekadar alat politik yang bermaksud untuk menenangkan dan mengintegrasikan kembali individu-individu atau kelompok-kelompok dalam konteks penerimaan mereka terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Timor-Leste, namun, yang utama, harus dilihat sebagai proses yang harus menghasilkan kebenaran.

39. Dengan suara bulat, Kongres merekomendasikan berdirinya “Komisi untuk Pemukiman Kembali dan Rekonsiliasi Nasional”. Komite Pengarah yang bertugas untuk merancang proposal pun dibentuk. Komite ini terdiri atas perwakilan CNRT, LSM hak asasi manusia Timor-Leste, organisasi pemuda, Gereja Katolik - Komisi Keadilan dan Perdamaian, Asosiasi Eks-Tahanan Politik (Assepol), Falintil, UNTAET, dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees, Komisaris Tinggi PBB bagi Pengungsi). Tugas pertama Komite tersebut adalah melaksanakan konsultasi dengan masyarakat di seluruh Timor-Leste, demikian juga dengan para pengungsi Timor-Leste di Timor Barat serta daerah lainnya di Indonesia. Tujuan konsultasi ini adalah untuk mengumpulkan informasi untuk mendapatkan pemahaman tentang sikap dan pandangan rakyat Timor-Leste terhadap hal-hal yang menyangkut rekonsiliasi.

40. Seusai Kongres tersebut, misi UNTAET diminta bantuannya. Sérgio Vieira de Mello, Administrator Transisi, menominasikan Unit Hak Asasi Manusia misi UNTAET untuk berperan atas nama PBB dalam mendukung Komite Pengarah.

41. Komite Pengarah lalu mengadakan konsultasi lebih lanjut dengan komunitas-komunitas di seluruh Timor-Leste dari September 2000 sampai Januari 2001. Komite ini mengunjungi 13 distrik, mengadakan pertemuan publik di tingkat distrik, subdistrik, dan desa. Mereka juga berkonsultasi dengan partai-partai politik, ahli-ahli hukum, dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Mereka mendapatkan dukungan komunitas yang luarbiasa bagi sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Hasil konsultasi publik Komite Pengarah

42. Tema-tema berikut didapat dari konsultasi-konsultasi Komite Pengarah.

Pencarian Kebenaran dan Keadilan:

1. Keadilan harus ditegakkan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan berat.

2. Adalah penting bagi masa depan Timor-Leste untuk belajar dari sejarah konflik. Menyelidiki masa lalu dan menegakkan kebenaran perlu dilihat sebagai sesuatu yang mendasar dalam upaya yang kukuh untuk membangun negara. Walaupun demikian, membuka luka lama memiliki risiko tersendiri, dan menggali masa lalu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Bila tidak, pengungkapan duka-duka lama hanya akan menimbulkan kemarahan, salah-menyalahkan, atau bahkan tindak kekerasan baru.
3. Walaupun kasus-kasus pelanggaran berat paling banyak terjadi selama masa pendudukan panjang oleh kekuatan militer Indonesia, masih ada risiko terjadinya kembali kemarahan yang belum tertuntaskan, terkait konflik antarpantai 1974 - 1975. Menyelidiki dan melaporkan kebenaran tentang pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota UDT, Fretilin, dan Falintil, termasuk para individu yang sekarang memegang posisi senior di pemerintahan, angkatan bersenjata, dan kepolisian, menjadi tantangan tersendiri.
4. Masih ada sisa-sisa kemarahan dari para pendukung kemerdekaan terhadap mereka yang berpihak pada kekuatan pendudukan Indonesia, serta terhadap para mantan anggota kelompok-kelompok milisi. Perlu diambil langkah-langkah praktis untuk mengurangi ketegangan tersebut.
5. Banyak pendukung otonomi merasa perlu adanya pendidikan umum tentang prinsip-prinsip toleransi politik. Mendukung sebuah tujuan politik otonomi bukanlah kejahatan, dan orang-orang yang mendukung posisi politis tersebut tidak boleh dihukum dengan cara apa pun.
6. Banyak perempuan korban perkosaan mendukung ide tentang adanya komisi yang memiliki fungsi pencarian kebenaran.
7. Para anggota keluarga dari mereka yang menghilang meminta bantuan dalam usaha mereka mengetahui nasib orang-orang yang mereka cintai.
8. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas tindakan para petugasnya, khususnya para anggota pasukan keamanan dan kakitangannya, warga Timor yang ada di bawah kendali mereka. Tanggung jawab tersebut harus termasuk pembayaran kompensasi bagi para korban dari pelanggaran yang disponsori oleh pemerintah ini.
9. Perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Portugal, dan Indonesia harus diselidiki sehubungan dengan persetujuan-persetujuan 5 Mei yang menetapkan syarat dan kondisi penyelenggaraan Jajak Pendapat. Persetujuan ini memberi tanggung jawab kepada Pasukan Indonesia atas keamanan selama Jajak Pendapat 1999, sementara para anggota dari kekuatan ini diketahui sebelumnya pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara luas.

Rekonsiliasi:

1. Pandangan bahwa rekonsiliasi adalah sesuatu yang mungkin terjadi, diterima secara luas, namun harus ada akuntabilitas dan keadilan bagi kejahatan berat di masa lalu, termasuk yang terjadi sebelum 1999.

2. Kebutuhan rekonsiliasi pada tingkat desa tidak boleh terlewatkan. Muncul ungkapan ketidakpuasan bahwa upaya rekonsiliasi sampai saat itu hanya difokuskan pada para pemimpin. Perlu ada upaya yang terorganisasi untuk mencoba menyelesaikan perselisihan masa lalu pada tingkat akar-rumput.
3. Para tetua desa atau pemimpin tradisional dan sistem tradisional harus dilibatkan dalam proses penerimaan dan rekonsiliasi.
4. Gereja Katolik dan budaya pengakuan dosa dan pemberian maaf dapat memegang peranan penting dalam proses rekonsiliasi di tingkat komunitas.
5. Komisi harus melibatkan para pengungsi di Timor Barat. Komisi harus menjalankan program penyebaran informasi di Timor Barat untuk meluruskan informasi salah yang disebarakan ke pengungsi tentang kondisi di Timor-Leste.

Mendukung para korban:

1. Dukungan bagi rehabilitasi para korban, misalnya para mantan tahanan politik dan korban penyiksaan, harus diberikan dan kompensasi bagi para korban harus dipertimbangkan.
2. Para korban dengan sangat kuat menyatakan bahwa mereka menuntut pertanggungjawaban dan keadilan, serta menentang segala usulan amnesti.
3. Para Komisaris harus tahu tentang hak asasi manusia dan dihormati di komunitas.
4. Komisi harus beroperasi di tingkat desa dan harus melakukan penyuluhan tentang sifat pekerjaannya kepada masyarakat.
5. Komisi bukanlah pengganti peran sistem peradilan formal dan pengadilan. Selayaknya Komisi bekerja berdampingan dengan proses pengadilan untuk mendukung baik keadilan maupun rekonsiliasi.
6. Muncul kekhawatiran mengenai kemampuan Komisi untuk menangani banyaknya kejahatan dan pelanggaran selama 24 tahun konflik.

Memilih nama Komisi

43. Pada pertemuan-pertemuan Komite Pengarah terjadi debat panjang mengenai nama Komisi; bahwa baik kebenaran maupun rekonsiliasi harus ada di dalam nama tersebut disetujui dengan cepat. Tapi, Komite merasa bahwa nama tersebut harus mencerminkan nilai-nilai filosofis, budaya, dan spiritual warga Timor-Leste, yang penting dalam peran Komisi untuk memulihkan perpecahan antara berbagai individu dan kelompok. Nilai-nilai tersebut dapat dideskripsikan, namun sulit untuk diungkapkan dalam satu kata. Pada akhirnya disetujui bahwa kata bahasa Portugis, yakni 'acolhimento', paling tepat mencakup nilai-nilai tersebut. Walau memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, 'penerimaan', dan dalam bahasa Inggris 'reception', istilah *acolhimento* memiliki konotasi yang lebih luas daripada itu, termasuk di dalamnya adalah penyambutan, penerimaan, keramahtamahan, dan pemberian maaf. Dalam budaya Timor, kata tersebut berhubungan dengan sikap santun resmi yang ditujukan kepada orang lain

sebagai manusia yang memiliki keunikan martabat, takdir, dan identitas spiritual. Ini memberi kemampuan bagi masyarakat untuk menerima dengan terhormat orang-orang yang bahkan telah merugikan mereka di masa lalu. Karena tugas Komisi adalah untuk meluluhkan pembatas antara pelaku dan korban dari konflik politik, kata tersebut kemudian dimasukkan ke dalam nama Komisi. Dalam diskusi-diskusi Komite Pengarah makna dari *acolhimento* ini dibandingkan dengan kisah alkitab tentang seorang anak hilang, yang diterima kembali dengan kegembiraan dan hati yang lapang.

Regulasi Nomor 10/2001, Pembentukan Komisi

44. Komite Pengarah menggunakan rekomendasi yang dihasilkan dari konsultasi, mendebatkan masalah kebijakan, dan merumuskan rancangan undang-undang untuk mendirikan komisi melalui upaya intensif selama tiga bulan. Bantuan teknis disediakan oleh UNTAET dan International Center for Transitional Justice (ICTJ).^{*} Penulisan rancangan Regulasi sangat banyak menggunakan hasil konsultasi komunitas; hasil-hasil ini tertuang dalam mandat dan metodologi Komisi.

45. Pada saat rancangan Regulasi tengah dipersiapkan, UNTAET masih memegang penuh kewenangan administratif. UNTAET mendapat mandat untuk membantu mempersiapkan Timor-Leste menuju kemerdekaan. Sebagai satu langkah transisi dibentuk sebuah Dewan Nasional, yang mencakup keterwakilan luas dari partai-partai politik di Timor-Leste, komunitas religius, dan dari masyarakat sipil. Setelah menerima hasil pengesahan kabinet, rancangan legislasi kemudian diajukan ke Dewan Nasional. Rancangan ini memuat semua perincian pertimbangan dari komite khusus Dewan Nasional.

46. Wakil-wakil dari Komite Pengarah hadir di hadapan sidang pleno Dewan Nasional untuk menjelaskan rencana undang-undang yang tengah diajukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para anggota Dewan. Walaupun tampak adanya antusiasme bagi proposal tersebut, dan ia disetujui secara prinsip oleh seluruh anggota Dewan, hal-hal yang ditangani proposal ini menimbulkan debat yang amat berarti dan kadang emosional.

47. Sebagian besar anggota Dewan ingin dilibatkan dalam proses pertimbangan teknis Regulasi tersebut sehingga tidak meneruskan rancangan ini kepada komite khusus mana pun. Alih-alih, sebuah komite baru dibentuk khusus untuk membahas rancangan Regulasi ini dan memungkinkan adanya diskusi-diskusi yang lebih terperinci. Dewan Nasional akhirnya mengesahkan rancangan tersebut setelah memahasnya selama satu bulan. Regulasi tentang pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) akhirnya disahkan oleh Dewan Nasional pada 13 Juni 2001.[†] Dewan Nasional kemudian mengajukan rancangan akhirnya kepada Administrator Transisi dengan rekomendasi agar dia mengukuhkan

^{*} ICTJ adalah organisasi non-pemerintah yang berbasis di New York, membantu negara-negara yang tengah mengupayakan akuntabilitas bagi kejahatan massal atau pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. www.ictj.org

[†] Anggota Dewan Nasional terdiri atas 32 orang; 30 orang mendukung regulasi tersebut, satu orang abstain, dan satu orang menolak.

rancangan tersebut sebagai undang-undang. Administrator Transisi, Sérgio Vieira de Mello, mengukuhkan undang-undang ini pada 13 Juli 2001.

48. Pendirian Komisi tersebut didukung oleh para pemimpin politik dari semua pihak, organisasi-organisasi non-pemerintah, Gereja Katolik dan komunitas keagamaan lainnya, misi PBB, UNHCR, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, badan-badan internasional lainnya, serta negara-negara donor. Dukungan bagi Komisi ini begitu tingginya, sehingga Komisi ini juga disebut di dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste, pasal 162. Pada saat Konstitusi ditandatangani pada Mei 2002, Komisi telah memulai kerjanya.

Kantor Interim

49. Sebuah Kantor Interim didirikan pada Agustus 2001, setelah Regulasi nomor 10/2001 dikukuhkan. Tugas-tugas kantor ini adalah mendukung Komite Pengarah dalam mengimplementasikan proses seleksi untuk Komisaris Nasional dan mencari dukungan dana untuk pembentukan Komisi dan mencari tempat untuk kantor Komisi di tingkat regional dan nasional. Kantor Interim didukung oleh Unit Hak Asasi Manusia UNTAET dan mempekerjakan sebuah tim kecil, yang dipimpin oleh Pat Walsh dari Unit Hak Asasi Manusia sebagai Direktur Eksekutif, dan Jacinto das Neves Raimundo Alves dan José Estevão Soares, sebagai Penasihat Kebijakan Senior. Kantor Interim berkantor di bekas Balai Pendidikan Guru (BPG), yang dulunya digunakan sebagai Markas UNAMET dan belakangan Markas CNRT, di Balide, Dili.

Dewan Penasihat CAVR

50. Pada 2002, Dewan Penasihat CAVR dibentuk untuk menyediakan saran dan masukan bagi para Komisaris Nasional. Para anggota yang berasal dari Timor-Leste adalah Uskup Carlos Felipe Ximenes Belo, SDB; Uskup Basilio do Nascimento; Madre Zulmira Osorio Soares; José Ramos-Horta; Pastora Maria de Fatima Gomes; dan Ana Pessoa Pinto. Para anggota internasionalnya yakni Sérgio Vieira de Mello, Ian Martin, Saporinah Sadli, dan Munir SH.

51. Komisi mengenang dengan kesedihan bahwa dua dari anggota internasional Dewan Penasihat CAVR telah dibunuh pada masa kerja Komisi.* Komisi memberikan penghargaan pada dedikasi dan keberanian Sérgio Vieira de Mello serta Munir SH, dua orang sahabat dan pendukung CAVR, yang hidup dan wafat bagi prinsip-prinsip dan komitmen mereka sebagai pelindung hak-hak asasi manusia.

* Sérgio Vieira de Mello, yang pernah bertugas sebagai Administrator Transisi di Timor-Leste dari 25 Oktober 1999 sampai 20 Mei 2002 selama periode Administrasi UNTAET, adalah Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ketika beliau meninggal dalam sebuah ledakan bom di kantor pusat PBB di Baghdad pada 19 Agustus 2003, saat ia sedang memimpin misi PBB untuk Irak. Munir SH, seorang pengacara hak asasi manusia Indonesia, dikenal atas perannya dalam perjuangan menentang kekerasan yang disponsori militer di Indonesia. Beliau adalah pendiri KontraS, Komisi untuk Orang-orang Hilang dan Korban Kekerasan, dan ketua Imparsial, Human Rights Watch Indonesia. Beliau meninggal akibat diracun arsenik dalam penerbangan menuju Belanda pada 7 September 2004.

Pembentukan Komisi

Komisaris Nasional

52. Konsultasi langsung dengan masyarakat Timor-Leste pada masa pembentukan komisi berperan penting untuk mendirikan dan mempertahankan legitimasi Komisi di mata publik. Adalah sangat penting untuk menjaga unsur ini untuk dapat menyelesaikan mandat Komisi dengan baik. Bagian 4 dari Regulasi nomor 10/2001 memberi wewenang kepada Administrator Transisi untuk menunjuk antara lima sampai tujuh orang Komisaris Nasional, termasuk setidaknya 30% perempuan, atas saran Panel Seleksi yang terdiri atas para wakil partai-partai politik utama dan kelompok masyarakat sipil yang relevan.^{*} Setelah pembentukannya, Panel Seleksi mengunjungi seluruh Timor-Leste dan ke Indonesia untuk mengumpulkan nominasi untuk posisi Komisaris Nasional dan Regional. Selain itu, organisasi politik, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil, serta beragam kelompok komunitas dalam jumlah yang besar juga berpartisipasi dalam proses pencalonan.

53. Regulasi memberikan kuasa kepada Panel Seleksi untuk memasukkan sebanyak-banyaknya dua orang ‘anggota internasional’ sebagai Komisaris Nasional. Sejumlah kecil warga negara asing dengan pengalaman baik dalam bidang hak asasi manusia dinominasikan. Namun Panel Seleksi memutuskan bahwa sebaiknya warga Timor-Leste yang dinominasikan secara umum yang pada akhirnya akan bertanggung jawab mengenai kebijakan, program, dan temuan Komisi, dan hanya orang-orang yang telah mendapat pengajuan dari publik selama konsultasi masyarakat yang dapat ditunjuk sebagai Komisaris Nasional.

54. Pada 21 Januari 2002, Administrator Transisi, Sérgio Vieira de Mello, mengambil sumpah jabatan calon-calon yang direkomendasikan oleh Panel Seleksi sebagai Komisaris Nasional. Mereka yang ditunjuk adalah Aniceto Guterres Lopes, Padre Jovito do Rêgo de Araújo, Maria Olandina Isabel Caeiro Alves, Jacinto das Neves Raimundo Alves, José Estevão Soares, Pendeta. Agostinho de Vasconcelos, serta Isabel Amaral Guterres. Komisi mengadakan pertemuan resmi pertamanya pada 4 Februari 2002, ketika Ketua serta Wakil Ketua dipilih dan pos portofolio khusus disetujui, yakni sebagai berikut:

^{*} Para anggota panel seleksi antara lain João Francisco Amaral, Maria Barreto, Francisco Miranda Branco, Patrick Burgess, Brigida Correia, Jacinto Alves Correia, Quiteria da Costa, Adelino Freitas, Cecilio Caminha Freitas, Jacob Martins dos Reis Fernandes, Galuh Wandita Soedjatmoko, dan Julião Mausiri. Bagian 4 dari Regulasi mensyaratkan bahwa Panel Seleksi memasukkan seorang wakil dari empat partai politik, yakni Partido Trabalhista, Partido KOTA, Fretilin, dan UDT; seorang wakil dari kelompok pro-otonomi (akan dinominasikan oleh Administrator Transisi setelah berkonsultasi dengan kelompok-kelompok pro-otonomi); Forum LSM; jaringan perempuan Rede; organisasi pemuda Presidium Juventude; Asosiasi Eks-Tahanan Politik (Assepol); Asosiasi Keluarga Orang-orang Hilang; nominasi bersama Diones Dili dan Diones Baucau; serta Kantor urusan Hak Asasi Manusia UNTAET. Bagian 4.3 mengharuskan Panel untuk menjalankan konsultasi yang luas dalam seleksi Komisaris, mencakup proses nominasi publik.

1. Ketua: Aniceto Guterres Lopes
2. Wakil Ketua: Padre Jovito do Rêgo de Araújo
3. Bendahara: Maria Olandina Isabel Caeiro Alves
4. Portofolio Pencarian Kebenaran: Jacinto das Neves Raimundo Alves dan José Estevão Soares
5. Portofolio Rekonsiliasi Komunitas: Pendeta Agustinho de Vasconcelos dan Jacinto das Neves Raimundo Alves
6. Portofolio Penerimaan dan Dukungan Korban: Isabel Amaral Guterres

Profil Komisaris Nasional

Aniceto Guterres Lopes, Ketua

Aniceto lahir di Tapo, Maliana, Distrik Bobonaro pada 1967. Ia mempelajari hukum di Universitas Udayana. Ia anggota Renetil (Resistencia Nacional dos Estudantes de Timor-Leste, Resistansi Nasional Pelajar Timor-Leste), organisasi pelajar untuk resistansi nasional sejak 1989. Ia menjabat Sekretaris Jenderal Yayasan ETADep (East Timor Agriculture and Development Project, Proyek Pembangunan dan Pertanian Timor Timur), salah satu organisasi non-pemerintah Timor Timur pertama, dari 1992 sampai 1996. Aniceto adalah pendiri dan, sejak 1997, direktur organisasi non-pemerintah Timor pertama di bidang hak asasi manusia, yakni Yayasan HAK. Ia bekerja untuk memajukan keadilan di Timor-Leste pada tahap-tahap awal Administrasi Transisi PBB, bekerja pada Komisi Pelayanan Peradilan Transisi UNTAET dari Januari 2000, dan Pendiri Asosiasi Pengacara Timor-Leste pada April 2000. Ia juga anggota dari Dewan Nasional Timor-Leste (Oktober 2000 - Juli 2001). Ia ditunjuk sebagai Komisaris Nasional pada 2002. Aniceto adalah penerima Penghargaan Ramon Magsaysay untuk kategori Kepemimpinan Baru pada 31 Agustus 2003. Setelah mengajar selama beberapa tahun di Universidade Paz di Dili, ia ditunjuk menjadi Dekan Fakultas Hukum pada April 2005. Beberapa bulan kemudian dia ditunjuk oleh Presiden Xanana Gusmão sebagai salah seorang anggota Dewan Nasional. Pada Agustus 2005, dia ditunjuk menjadi salah seorang Komisaris untuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

Padre Jovito do Rêgo de Jesus Araújo, Wakil Ketua

Padre Jovito lahir di Hatolia, Distrik Ermera, pada 1963. Ia telah menjadi pastor Katolik yang bertugas di Dili dan Aileu sejak 1996. Sebagai Presiden Komisi Pemuda Katolik dari Dioses Dili selama tiga

tahun sebelum ditunjuk menjadi anggota Komisi, ia telah menjalin hubungan yang erat dengan kalangan pemuda. Ia menjadi anggota Renetil sejak 1987. Ia memiliki minat khusus dalam advokasi hak asasi manusia khususnya dalam masalah kepemudaan. Pada September 2005, Padre Jovito melanjutkan pendidikannya di bidang Alkitab di Universitas Gregoriana, Roma, Italia.

Maria Olandina Isabel Caeiro Alves

Olandina berasal dari Distrik Ermera, tempat ia lahir pada 1956. Ia pengusaha wanita yang telah mengabdikan selama bertahun-tahun untuk pelayanan publik, khususnya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dia pernah bekerja sebagai Anggota DPRD tingkat I Timor Timur pada 1997 - 1999, juga pernah ditunjuk sebagai anggota Komisi Nasional untuk Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan pada 1998. Olandina menjabat direktur organisasi East Timorese Women Against Violence and for Child Care (ET-Wave) sejak 1998. Sejak 1999 Olandina telah bekerja untuk beberapa posisi kepemimpinan seperti; sebagai Ketua Komisi Pelayanan Publik pada 2000 - 2001; dari 2003 sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Jaringan Perempuan Timor-Leste (Rede Feto Timor-Leste); Ketua Gerakan Pramuka Timor-Leste; dan Presiden Habitat for Humanity untuk Timor-Leste. Dia juga adalah pendiri Peace and Democracy Foundation pada 2002 dan sejak saat itu menjadi anggota dewan. Olandina juga menjalankan restoran “Olandina” di Dili. Pada Agustus 2005, dia ditunjuk menjadi salah seorang anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

José Estevao Soares

José lahir pada 1955 di Laclubar, Distrik Manatuto. Antara Oktober 1975 dan Mei 1976 dia ditahan sebagai tahanan politik oleh Fretilin, karena afiliasi politiknya kepada Partai Apodeti. José bekerja sebagai pegawai negeri pada pemerintah Indonesia di Timor Timur. Ia menjadi juru bicara pemerintah dan Kepala Hubungan Masyarakat (1993-1997), dan kemudian bekerja pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Timor Timur (BKPMDD). Pada 1999, dia adalah salah satu anggota pendiri organisasi politik pro-otonomi Forum Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan (FPDK). Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Timor Timur pada 1999. José meninggalkan Timor-Leste pada September 1999, dan melewati masa satu tahun sebagai pengungsi di Denpasar, Bali (Indonesia), sebelum kembali pada Oktober 2000. Sekembalinya ke Timor-Leste, ia langsung menjadi anggota Dewan Nasional Timor-Leste (Oktober 2000 - Juli

2001). José juga pernah menjabat sebagai Penasihat Senior kebijakan pada Kantor Interim yang mendukung pembentukan Komisi.

Isabel Amaral Guterres

Isabel lahir di Luca, Distrik Viqueque pada 1958. Ia pernah bekerja pada berbagai organisasi dalam bidang bantuan kemanusiaan, termasuk bekerja dengan Jesuit Refugee Services (JRS), memberi dukungan bagi orang-orang yang kembali ke Timor-Leste pada 1999. Sebelumnya Isabel tinggal di Australia selama 15 tahun, tempat ia belajar di Aquinas and Mercy Catholic University, Victoria, dan bekerja sebagai perawat. Pada Maret 1999, dia melakukan kunjungan singkat ke Timor-Leste dalam rangka melaksanakan seminar tentang resolusi konflik. Sekembalinya ke Timor-Leste pada November 1999, ia terus menggunakan pengalaman profesionalnya di bidang kesehatan dalam kerjanya dengan Médecins Sans Frontières (MSF) dan World Vision. Isabel menjabat sebagai anggota dewan Palang Merah Timor-Leste hingga saat ini, dan ditunjuk menjadi Komisaris Elektoral untuk pemilihan kepala desa dan anggota dewan pada 2004 dan 2005.

Pendeta Agostinho de Vasconcelos

Pendeta Agostinho lahir pada 1970 di Kaiualita, Distrik Baucau. Pdt. Agostinho menyelesaikan pendidikannya dalam bidang filsafat keagamaan dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Tomohon, Indonesia pada 1995. Ia bertugas sebagai Pendeta Gereja Protestan di Timor Timur (Igerja Protestante Timor-Leste - IPTL) pada 1996 dan juga sebagai pendeta di Gereja Maranatha di Distrik Baucau (1999 - 2000), dan Distrik Oecussi (1996 - 1999). Pdt. Agostinho juga pernah menjabat sebagai anggota dewan Yayasan Sosial Naroman (1999 - 2000), Ketua Pemuda Protestan (2000 - 2004), Sekretaris Editorial pada majalah *KeEsaan* (2001 - 2002), dan saat ini bekerja sebagai Sekretaris Eksekutif pada Departemen Keadilan dan Perdamaian Gereja Protestan di Timor-Leste. Ia mengikuti berbagai lokakarya dan kursus mengenai rekonsiliasi di Timor Barat dan daerah-daerah lain di Indonesia dan terus terlibat secara aktif di beberapa LSM.

Jacinto das Neves Raimundo Alves

Jacinto lahir di Distrik Manatuto pada 1957. Pada 1979 dia bekerja untuk Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Jacinto pernah menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif Conselho Nacional da Resistência Maubere (CNRM) yang merencanakan Demonstrasi Santa Cruz. Setelah pembantaian Santa Cruz pada November 1991, dia ditahan. Dia menjalani hukuman selama tujuh tahun dari hukuman

sepuluh tahunnya di penjara dan dibebaskan pada 30 Desember 1998. Jacinto juga salah seorang anggota pendiri LSM Komisi Hak Asasi Manusia di Timor-Leste pada 1999 dan aktif menyediakan bantuan darurat untuk pengungsi di Dare setelah Jajak Pendapat pada September 1999. Kini sebagai Koordinator Asosiasi Eks-Tahanan Politik di Timor-Leste (Assepol) sejak awal 1999, Jacinto menjadi salah seorang dari dua orang perwakilan Assepol dalam Komite Pengarah yang mendirikan CAVR dan pada Juli 2001 sampai Januari 2002 menjabat sebagai Penasihat Kebijakan Senior untuk Kantor Interim yang mendukung pembentukan Komisi. Pada Maret 2005, Jacinto ditunjuk oleh Presiden Xanana Gusmão sebagai anggota Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan Nasional. Pada Agustus 2005, Jacinto ditunjuk oleh Presiden Xanana Gusmão sebagai salah seorang anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

Prinsip-prinsip dan misi Komisi

55. Segera setelah pengukuhan mereka pada upacara pengambilan sumpah pada 21 Januari 2002, para Komisaris Nasional melakukan retreat selama lima hari di Biara Karmel di Maubara, Distrik Liquiçá. Retreat ini menjadi momen penting dalam perkembangan Komisi, ketika para Komisaris bertukar pandangan mengenai pemahaman mereka tentang mandat dan merumuskan serangkaian prinsip yang selanjutnya mendasari kerja CAVR. Prinsip-prinsip itu di antaranya:

1. Berkomitmen untuk memajukan standar-standar hak asasi manusia universal di Timor-Leste; Komisi bersifat netral secara politik dan independen. Ia akan berupaya untuk menjangkau warga Timor-Leste dari semua latar belakang politik di dalam Timor-Leste dan di Indonesia. Ia akan berupaya untuk menyelidiki secara objektif berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik politik, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi semasa konflik internal pada 1974 – 1976.
2. Menempatkan para korban pelanggaran hak asasi manusia sebagai titik-pusat kerjanya dan menciptakan institusi yang bersahabat dan terbuka bagi para korban tersebut. Komisi akan mengakui dan menghargai pengalaman masa lalu mereka. Ia juga akan mencari cara-cara praktis untuk membantu mereka dan mengangkat peran mereka dalam pembangunan bangsa
3. Sepakat bahwa rekonsiliasi tidak akan dapat tercapai tanpa keadilan. Komisi akan menghargai tuntutan keadilan yang dibuat oleh warga Timor-Leste biasa, khususnya para korban pelanggaran hak asasi manusia. Komisi akan berupaya memahami apa yang dimaksud oleh korban sebagai keadilan dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk membantu memulihkan martabat para korban, serta memperbaiki kekerabatan yang rusak.

4. Sepakat bahwa menetapkan kebenaran dan akuntabilitas bagi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu adalah langkah penting untuk mencapai keadilan dan memulihkan martabat para korban.
5. Memahami bahwa rekonsiliasi dan pemulihan akan menjadi proses yang sulit dan panjang. Proses-proses ini memerlukan kontribusi aktif yang terus-menerus dari para keluarga, komunitas, dan organisasi-organisasi lain yang terlibat dalam pekerjaan yang sama. Dengan demikian, akan diupayakan penciptaan kemitraan dan komisi tidak akan menjadi institusi yang berdiri sendiri. Komisi akan berupaya untuk bekerja bagi rekonsiliasi dan menyumbang pada kelanjutan kerja semacam ini di luar mandatnya.
6. Mengakui pentingnya untuk memastikan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam proses rekonsiliasi. Ini berarti bahwa perempuan harus direkrut oleh Komisi dan bahwa anggota komunitas perempuan harus berpartisipasi dalam kegiatannya. Komisi mengakui bahwa terdapat kendala-kendala praktis, budaya, dan ekonomi bagi keikutsertaan perempuan, yang akan diusahakan untuk dapat diatasi.
7. Mengakui keragaman budaya Timor-Leste yang kaya seperti yang dijalankan dan diekspresikan di berbagai komunitas di penjuru negara. Komisi akan berusaha untuk memasukkan kekuatan nilai tradisional dan kebiasaan adat dalam kerjanya
8. Akan berupaya menjadi terbuka bagi warga Timor-Leste di seluruh negara dan di Indonesia dan bagi komunitas internasional yang lebih luas. Hal ini mengharuskan kerja di daerah-daerah paling terpencil di negara ini dan dalam bahasa setempat, serta dalam bahasa Inggris, Portugis, dan Indonesia.

Komisaris Regional

56. Para Komisaris Regional adalah wakil para Komisaris Nasional dan CAVR di distrik-distrik. Masyarakat setempat dengan mudah dapat berhubungan dengan Komisaris Regional yang dipilih untuk bekerja di distrik asal mereka, di lain pihak pada saat yang sama memberikan dukungan kepada tim-tim CAVR lainnya di distrik yang berdekatan. Hal ini sangat membantu dalam memfasilitasi keikutsertaan komunitas dalam program-program Komisi.

57. Peran para Komisaris Regional adalah untuk memimpin tim distrik masing-masing. Mereka memperkenalkan Komisi kepada masyarakat, khususnya kepada para pemimpin setempat. Para Komisaris Regional mengetuai panel pada audiensi rekonsiliasi komunitas. Mereka juga memainkan peran utama pada audiensi korban di subdistrik.

58. Regulasi mensyaratkan penunjukan antara 25 sampai 30 Komisaris Regional oleh Administrator Transisi, atas saran para Komisaris Nasional.³ Setelah melalui sebuah proses nominasi publik di masing-masing distrik, Administrator Transisi, Sérgio Vieira de Mello, mengambil sumpah 29 Komisaris Regional pada 15 Mei 2002. Sepuluh di antaranya adalah perempuan.

59. Berikut ini adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai Komisar Regional oleh CAVR:

Wilayah Aileu

- Aileu: Francisco Martins, Meta Mendonca
- Manufahi: Jaime da Costa (mengundurkan diri 2002); Saturnino Tilman

Wilayah Covalima

- Ainaro: Filomena Barros Pereira, Alarico da Costa Reis
- Covalima: Antonio Alves Fahik, Maria Nunes

Wilayah Baucau

- Baucau: Carolina M E do Rosario, Aleixo Ximenes
- Manatuto: Geraldo Gomes, Ildefonso Pereira
- Lautém: Albino da Silva, Justino Valentin
- Viqueque: Helena H X Gomes, Daniel Sarmento Soares

Wilayah Bobonaro

- Bobonaro: Ana de Fatima Cunha, Francisco dos Reis Magno, Domingas dos Santos
- Ermera: Eduardo de Deus Barreto, Egidio Maia

Wilayah Dili

- Dili: Teresinha Maria Cardoso, Pedro Correia Lebre, Joanico dos Santos
- Liquiçá: Maria Fernanda Mendes, Ana Maria J. dos Santos

Wilayah Oecussi

- Oecussi: Antonio da Costa, José Antonio Ote, Arnold Sunny

Hal-hal dan tantangan operasional

Tantangan praktis bagi kerja Komisi

60. Tahap operasional mandat Komisi dimulai pada 7 April 2002. Komisi didirikan pada masa ketika infrastruktur fisik, ekonomi, dan logistik di Timor-Leste masih dalam tahap rekonstruksi dini. Menyusul keadaan darurat kemanusiaan di akhir 1999, UNTAET mulai mengimpor dan memasang peralatan yang esensial bagi operasinya, termasuk jaringan internet satelit dan sistem telepon seluler di Ibukota Dili. Tapi, ketika itu belum ada hubungan telepon darat, email, dan pos antara Dili dan distrik-distrik, atau pun antardistrik, dan hanya ada layanan telepon seluler terbatas ketika Komisi didirikan.

61. Jalan-jalan berada dalam kondisi yang sangat parah di banyak daerah pelosok dan sering tidak dapat dilalui pada musim hujan. Padahal, interaksi antara kantor nasional dan kantor distrik mengharuskan para wakil untuk melakukan perjalanan di antara kantor-kantor ini. Hanya ada sedikit perusahaan swasta yang beroperasi. Transportasi sederhana dan peralatan kantor sangat sulit didapat, dan barang sering harus diimpor dari luar negeri. Barang kebutuhan dasar, seperti kertas dan pena, hanya tersedia di Dili. Ketiadaan fasilitas perbankan di luar Dili menjadikan transfer dana untuk pembayaran gaji bulanan atau untuk memenuhi kebutuhan operasional menjadi suatu tantangan keamanan dan logistik.

62. Komunikasi dengan daerah kantong Oecussi dan Atauro lebih sulit lagi. Daerah ini terisolasi dari wilayah Timor-Leste lainnya, dibatasi oleh laut dan perbatasan darat dengan Timor Barat, Indonesia. Perjalanan darat dari Timor-Leste menuju Oecussi sulit pasca-September 1999, dan semakin tidak memungkinkan setelah pembunuhan tiga staf internasional UNHCR di Atambua, Timor Barat, pada September 2000. Tidak ada layanan feri reguler ke daerah tersebut ketika Komisi didirikan. Satu-satunya hubungan udara yang ada disediakan oleh UNTAET, yang memprioritaskan transportasi staf dan barang PBB. Akses ke Pulau Atauro, sebuah subdistrik dari Distrik Dili, juga menghadirkan tantangan logistik.

63. Komisi mengambil pandangan bahwa rekonsiliasi, pencarian kebenaran yang menyeluruh dan objektif, serta dukungan korban yang efektif, hanya dapat dicapai jika Komisi mengukuhkan kehadirannya di seluruh wilayah negara. Memastikan bahwa masing-masing tim distrik mendapatkan dukungan logistik yang cukup, termasuk fasilitas transportasi dan komunikasi, menjadi teramat penting untuk mewujudkan tujuan ini. Masalah-masalah ini terus menjadi tantangan yang berat bagi program-program distrik Komisi selama periode operasi.

Tantangan bahasa

64. Konstitusi Timor-Leste mengakui dua bahasa resmi, Tetum dan Portugis, dan dua bahasa kerja, Indonesia dan Inggris. Banyak bahasa dan dialek lain yang digunakan di penjuru negara. Kebutuhan bekerja dalam banyak bahasa menjadi tantangan besar bagi Komisi dan dalam penyiapan Laporan Akhirnya. Walaupun ada tantangan demikian, Komisi mengupayakan tingkat partisipasi setinggi mungkin dengan menganjurkan orang-orang untuk menggunakan bahasa yang paling nyaman bagi mereka.

65. Selama masa operasinya, Komisi menggunakan bahasa Indonesia, Tetum, dan Inggris untuk dokumen-dokumen tertulis, dan Tetum sebagai bahasa lisan utama. Bahasa Portugis tidak cukup banyak digunakan oleh staf atau klien, baik secara tertulis atau lisan, untuk layak digunakan sebagai bahasa kerja. Bahasa Tetum tidak pernah diajarkan secara resmi di sekolah-sekolah negeri sebelum 1999. Sebagian besar staf tidak merasa cukup percaya diri untuk menulis dokumen-dokumen yang kompleks atau resmi dalam bahasa Tetum. Karena isu bahasa ini, sebagian besar staf internasional yang membantu dalam program-program dan untuk Laporan Akhir dapat berbahasa Tetum atau Indonesia, atau keduanya, selain bahasa Inggris.

66. Kegiatan lapangan Komisi dijalankan dengan bahasa setempat atau *lingua franca*, yakni Tetum. Di beberapa komunitas pedalaman, Tetum tidak begitu umum digunakan. Perekrutan staf lokal menjadi penting bagi pemahaman dan penerimaan lokal. Pernyataan dan wawancara penelitian biasanya dilakukan dalam bahasa Tetum atau Indonesia, dan ditulis dalam salah satu dari kedua bahasa tersebut. Sistem pengkodean *database* menggunakan bahasa Indonesia; ringkasan pernyataan ditulis dalam bahasa Tetum, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pernyataan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas ditulis dalam bahasa Indonesia atau Tetum.

67. Program-program nasional, seperti audiensi publik dan lokakarya tematis, dijalankan dalam bahasa Tetum, dengan penerjemahan ke dalam bahasa Inggris. Orang-orang Indonesia yang memberi kesaksian pada audiensi publik berbicara dalam bahasa Indonesia. Beberapa saksi menyampaikan kesaksian dalam bahasa-bahasa regional dan diterjemahkan ke Tetum, demikian pula beberapa ahli internasional. Unit Kejahatan Berat menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kerjanya, sehingga pernyataan-pernyataan yang dikirim ke Kejaksaan Agung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk dapat dipertimbangkan oleh staf internasional PBB yang bekerja sebagai jaksa penuntut. Dalam penulisan Laporan Akhirnya, Komisi menggunakan materi berbahasa Inggris, Indonesia, Portugis, dan Tetum.

68. Masalah bahasa menjadi tantangan yang sangat berat bagi proses penulisan Laporan Akhir. Para penulis adalah orang Timor-Leste yang menulis dalam bahasa Indonesia, dan para penulis internasional, yang menulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Draf dari bab-bab Laporan Akhir ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia, lalu diterjemahkan dari salah satu ke yang lainnya sehingga akan tersedia bagi para editor dalam kedua bahasa. Draf berbahasa Inggris yang sudah disunting harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebelum diberikan kepada para Komisaris untuk disahkan. Draf lalu didiskusikan oleh para Komisaris dalam bahasa Indonesia, berbagai perubahan dilakukan, kemudian disahkan. Versi bahasa Inggrisnya kemudian disesuaikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis.

69. Proses menghasilkan Laporan Akhir dalam tiga bahasa ini sangat kompleks dan menghabiskan banyak waktu.

Pendekatan terpadu berbasis komunitas

70. Regulasi telah memberi kerangka kerja bagi Komisi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan spesifik yang berfokus pada pencarian kebenaran dan rekonsiliasi komunitas. Tujuan inti yang lain adalah untuk membantu memulihkan martabat korban. Pada dasarnya Komisi bertanggung jawab untuk merancang kebijakan dan kegiatan yang terbaik dalam mencapai tujuan yang dimandatkan.

71. Kehendak masyarakat yang terungkap dalam konsultasi Komite Pengarah terwujud dalam pendirian Komisi dan dalam syarat-syarat yang tertuang dalam Regulasi No. 10/2001. Kebutuhan-kebutuhan dan kehendak anggota masyarakat adalah untuk sedapat mungkin memberi arahan bagi pengembangan dan

implementasi kebijakan-kebijakan ini. Prinsip konsultasi komunitas ini terus berperan dalam membentuk keputusan-keputusan Komisi selama masa operasi mandatnya.

72. Konsultasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan terjadi pada tahap permulaan dan pada masa awal operasi. Hasilnya, sejumlah proyek percontohan dijalankan yang memberi informasi tambahan untuk merancang program-program yang efektif. Komisi menjalankan tiga proyek percontohan (lihat kotak di bawah) untuk membantu menentukan bagaimana mandat dapat dilaksanakan seefektif mungkin. Setiap proyek berfokus pada bidang kegiatan tersendiri di mana Komisi berencana untuk terlibat. Komisi terus membuka diri untuk usulan-usulan tambahan dari kalangan umum selama masa operasi.

Proyek percontohan mengenai pencarian kebenaran, rekonsiliasi komunitas, dan dukungan korban

Pencarian Kebenaran

Proyek percontohan pertama berfokus pada pencarian kebenaran di tingkat komunitas, khususnya proses pengambilan pernyataan. Proyek ini dilakukan di komunitas-komunitas di Pulau Atauro, Dili (Dili) 28 Mei - 7 Juni, dan 22 - 30 Juni 2002. Tahap pengenalan dan persiapan disusul oleh pengambilan pernyataan yang menghasilkan 33 pernyataan dari para korban dan saksi, yang berhasil mendokumentasi sejumlah pelanggaran termasuk pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, dan pemindahan paksa.

Proyek percontohan ini menghasilkan pelajaran berharga dalam hal logistik dan metodologi. Komisi merevisi kebijakannya mengenai bahasa dalam pengambilan pernyataan, untuk memungkinkan pernyataan ditulis dalam bahasa Tetum atau Indonesia. Komisi juga memutuskan untuk merekam semua wawancara untuk menjamin keakuratan. Para pengambil pernyataan menemukan bahwa para saksi senang mendengar rekaman kesaksian mereka diputar kembali. Hal ini semakin memperkuat kepercayaan diri mereka mengenai keandalan cara Komisi dalam mendokumentasi pernyataan mereka.

Profil Komunitas

Komisi memfasilitasi sebuah diskusi komunitas mengenai dampak pelanggaran hak asasi manusia di Metinaro di Distrik Dili pada 27 September 2003 sebagai proyek percontohan kedua. Diskusi yang

demikian selanjutnya dikenal sebagai lokakarya Profil Komunitas. Dua alat utama digunakan untuk memfasilitasi diskusi ini. Kegiatan pembuatan garis waktu timeline membantu memusatkan diskusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang dialami komunitas antara 1974 dan 1999. Sesi pembuatan peta melibatkan anggota komunitas untuk menggambar peta yang menunjukkan tempat-tempat utama terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai pertanyaan kemudian diajukan kepada komunitas mengenai dampak kolektif pelanggaran-pelanggaran ini, khususnya yang dialami perempuan dan anak-anak. Lokakarya semacam ini bermaksud untuk memberi sebuah perspektif komunitas mengenai dampak pelanggaran-pelanggaran. Hal ini akan melengkapi fokus individual dari pengambilan pernyataan dan untuk membantu mengkaji dampak kekerasan secara keseluruhan pada masyarakat Timor-Leste. Proyek percontohan ini memberi pelajaran berharga mengenai fasilitasi lokakarya komunitas dan metode-metode dokumentasi, yang membantu pelatihan staf selanjutnya.

Prosedur Rekonsiliasi Komunitas

Proyek percontohan ketiga adalah audiensi rekonsiliasi komunitas. Proyek ini pertama kali dilaksanakan oleh Komisi pada 23 Agustus 2002, di Maumeta, Distrik Liquiçá, tiga orang pelaku (deponen) berpartisipasi dalam audiensi yang dihadiri oleh sekitar 150 anggota komunitas, Komisaris Nasional, dan Jaksa Agung. Sembari memperkenalkan mandat Komisi dan dasar hukum bagi audiensi yang diselenggarakan, Komisaris Regional Ana Maria J. dos Santos mengetuai panel yang terdiri atas para pemuka setempat. Para deponen memberi kesaksian, mengakui kesalahannya kepada para korban dan anggota komunitas. Mereka bersumpah tidak akan pernah menggunakan kekerasan lagi untuk kepentingan politik. Para korban dan anggota komunitas lalu mendapat giliran berbicara, menceritakan versi mereka sendiri mengenai kejadian-kejadian yang digambarkan oleh para pelaku. Para tetua adat membersihkan lokasi dari roh-roh jahat, dan mengundang para pelaku serta korban untuk duduk bersama di atas *biti boot* (harfiahnya: tikar besar, tempat masyarakat menyelesaikan perselisihan secara adat).

Panel yang memimpin audiensi kemudian berembuk dengan para korban dan anggota komunitas, serta dengan para deponen. Diputuskan untuk menerima permintaan maaf para pelaku dan tidak menjatuhkan sanksi apapun. Audiensi ini menunjukkan kebaikan memadukan unsur-unsur proses hukum formal dengan prinsip-prinsip kebiasaan adat. Perpaduan dua sumber ini memberi prosedur ini legitimasi penuh di mata para anggota komunitas. Audiensi menunjukkan pentingnya unsur kepemilikan lokal dalam

menjalankan proses rekonsiliasi. Hal ini juga memperlihatkan tingkat pengorganisasian dan dukungan logistik yang diperlukan jika anggota komunitas dalam jumlah banyak akan menghadiri audiensi-audiensi di masa mendatang. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia saat itu, Mary Robinson, dan para pejabat senior UNMISSET juga menghadiri acara ini.

73. Komisi percaya bahwa kemajuan ke arah rekonsiliasi bergantung pada berbagai langkah praktis yang diambil untuk mendorong pemulihan. Syarat-syarat agar pemulihan ini terjadi mencakup mencari dan memublikasikan kebenaran sejarah, dan mengakui pengalaman para korban untuk membantu pemulihan emosi mereka. Berbagi pengalaman secara terbuka seperti ini memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bertikai, baik di tingkat akar-rumput maupun antara pemimpin lokal dan nasional, untuk berekonsiliasi. Pengambilan pernyataan, audiensi publik, dan pertemuan rekonsiliasi komunitas menghasilkan rekaman yang akurat dan mudah diakses mengenai kejadian-kejadian di distrik yang terkait konflik. Kegiatan-kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan untuk memenuhi tujuan ini mencakup:

- Pengambilan pernyataan dari para saksi dan korban pelanggaran di seluruh pelosok Timor-Leste dan Timor Barat
- Melakukan wawancara penelitian bersasaran dengan para saksi dan korban
- Menyelenggarakan audiensi publik nasional dengan tema-tema yang penting menurut mandat dan memberikan audiensi tersebut publisitas seluas mungkin dengan menyiarkannya di radio dan televisi
- Melaksanakan prosedur rekonsiliasi komunitas
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencatat sejarah konflik di desa dan kampung mereka serta dampak spesifik konflik terhadap mereka
- Mengadakan audiensi korban di tingkat subdistrik sehingga para korban dapat menceritakan pengalamannya, agar keberanian dan penderitaan yang telah mereka alami dapat diakui
- Mengadakan lokakarya pemulihan di kantor nasional bagi para korban yang terkena dampak konflik secara serius. Mereka berbagi pengalaman dan berpartisipasi dalam penyuluhan kelompok dan kegiatan lain yang dirancang untuk mendorong pemulihan
- Memberikan reparasi mendesak untuk sejumlah korban yang paling membutuhkan bantuan pengobatan dan bantuan langsung lainnya
- Membuat dan menyiarkan program radio mingguan tentang hal-hal yang berkaitan dengan rekonsiliasi
- Merancang dan mendorong suatu program informasi di kamp-kamp pengungsi Timor Barat

- Mengadakan kunjungan para Komisaris Nasional ke Timor Barat untuk bertemu dengan para pemimpin pro-otonomi di sana
- Mendirikan arsip dan perpustakaan untuk berbagai dokumen dan bahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan sejarah konflik yang dihasilkan dari kerja Komisi.

Rencana strategis

74. Mandat dan kegiatan Komisi seperti ini belum pernah ada dalam sejarah di Timor-Leste. Dalam menyusun kerangka kerja institusi, kebijakannya, kegiatan dan mekanisme dukungan administratifnya, para pendirinya tidak dapat menggunakan model yang sudah ada, pengetahuan tentang institusi sejenis, atau staf yang berpengalaman tentangnya. Staf Komisi menggunakan suatu rencana strategis formal untuk memberikan suatu kerangka kerja yang konsisten dan dapat direalisasikan untuk mencapai tujuannya, dan telah disahkan oleh para Komisaris Nasional pada Mei 2002.

75. Rencana tersebut memberikan peluang bagi suatu tim multidisipliner yang terdiri atas orang-orang Timor-Leste dan berkebangsaan asing di kantor nasional dan dalam tim distrik untuk menjaga arah yang jelas sepanjang periode operasional. Rencana tersebut diawali dengan bagaimana institusi dapat berkembang dari suatu tim kecil di Kantor Nasional menjadi sebuah institusi beranggotakan 270 pegawai yang melaksanakan beragam program yang tersebar di 13 distrik. Rencana ini juga menyediakan kerangka kerja untuk mengurangi skala operasi institusi dari skala puncak ke sebuah tim kecil yang perhatian utamanya adalah penyelesaian Laporan Akhir dan kemudian menutup Komisi. Rencana strategis ini menjadi acuan bagi para Komisaris dan stafnya sejalan dengan penambahan atau modifikasi program, dan turut membangun kepercayaan para donatur dan pemangku kepentingan lain bahwa Komisi memiliki rencana yang jelas dalam pemenuhan mandatnya.

76. Rencana tersebut membuat garis besar pendekatan terpadu terhadap kerja lapangan Komisi dalam tiga wilayah program inti, yaitu pencarian kebenaran, rekonsiliasi komunitas, dan dukungan korban. Rencana ini membagi kerja Komisi ke dalam 13 periode. Dalam setiap periode tersebut kegiatan dilakukan berdasarkan jadwal waktu yang ketat. Implikasi dan indikator administratif dan logistik dari tujuan-tujuan yang tercapai juga dijabarkan. Faktor-faktor sejarah, budaya, politik, dan logistik setempat dipertimbangkan dalam menyusun waktu dan sifat kegiatan yang akan dijalankan di setiap subdistrik.

77. Tim distrik secara umum melaksanakan program kerja yang sama di ke-65 subdistrik, memusatkan sumberdayanya pada satu subdistrik selama tiga bulan, sebelum melanjutkan ke subdistrik berikutnya. Selama enam minggu pertamanya di sebuah subdistrik, tim distrik mengadakan pertemuan dan konsultasi. Periode intensif kerjasama ini turut memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antara para pemimpin setempat dan perwakilan Komisi. Perekrutan tim distrik dari daerah setempat menunjukkan komitmen Komisi pada pendekatan kerja sama

dengan masyarakat setempat. Hal ini memberikan pemahaman lebih mendalam akan kondisi setempat, dan memungkinkan komunikasi langsung dengan bahasa dan dialek setempat. Berbagai kegiatan pencarian kebenaran, prosedur rekonsiliasi komunitas, dan dukungan korban diselenggarakan secara terpisah dan dijalankan oleh tim-tim yang berbeda, tetapi hanya satu program pendidikan diperlukan di setiap subdistrik, dan dukungan logistik digunakan bersama.

78. Kerja terpadu di subdistrik mengikuti serangkaian langkah standar. Para Komisariss regional dan tim distrik memulai kerja mereka dengan mengadakan pertemuan publik untuk menjelaskan mandat Komisi dan inti program kerjanya. Para anggota masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran dan kekhawatiran mereka. Tim distrik sering melaksanakan berbagai diskusi dan pertemuan secara informal. Masyarakat diminta untuk memberikan ulasan mengenai masa-masa penting dan berbagai insiden kekerasan selama 25 tahun periode mandat. Tim distrik mengidentifikasi komunitas yang mungkin memiliki permintaan tinggi akan pencarian kebenaran, pengambilan pernyataan, dan kerja rekonsiliasi komunitas.

79. Staf dukungan korban dan penjangkauan memfasilitasi berbagai diskusi kelompok mengenai dampak pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan pertemuan lanjutan dengan para individu yang tertarik untuk memberikan pernyataan mengenai berbagai pelanggaran hak asasi manusia atau berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi komunitas. Para pengambil pernyataan pencarian kebenaran akan mulai mengambil pernyataan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Ketika para korban dengan kebutuhan mendesak teridentifikasi selama wawancara, mereka dialihkan ke staf dukungan korban untuk ditindaklanjuti. Staf rekonsiliasi juga mengambil pernyataan dari orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam prosedur rekonsiliasi komunitas. Mereka mengatur berbagai audiensi untuk kasus-kasus yang telah disetujui oleh Kejaksaan Agung.

80. Kegiatan terakhir dari program subdistrik tiga bulan adalah Audiensi Korban yang diatur oleh para Komisariss Regional dan tim distrik, serta dihadiri oleh seorang Komisariss Nasional, wakil pemerintah setempat, para pemuka adat dan gereja, serta anggota kepolisian. Setelah audiensi tersebut Komisariss Regional memberitahukan kepada masyarakat mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan di subdistrik selama periode tiga bulan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa informasi yang telah dikumpulkan di subdistrik akan disimpan dengan aman di arsip CAVR dan akan digunakan dalam Laporan Akhir Komisi. Oleh karenanya, audiensi subdistrik merupakan cara yang secara bersamaan menutup kerja Komisi di daerah tersebut, memberi penghargaan atas dukungan dan sumbangan masyarakat selama periode tiga bulan tersebut, dan berbagi pengalaman mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di daerah tersebut.

Program-program inti

Pencarian kebenaran

81. Tujuan program pencarian kebenaran adalah untuk mendokumentasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik politik antara April 1974 dan Oktober 1999. Strategi yang dirancang adalah pengambilan pernyataan secara sistematis di seluruh subdistrik, penelitian terfokus, dan penyelenggaraan audiensi publik. Submisi-submisi, termasuk berbagai dokumen dan materi lain yang relevan, juga diupayakan untuk didapat dari berbagai sumber di dalam Timor-Leste maupun di luar negeri.

Pengambilan pernyataan dan pengolahan data

82. Komisi mengumpulkan 7.824 pernyataan dari 13 distrik dan 65 subdistrik di Timor-Leste.* Bersama dengan sebuah koalisi LSM lokal di Timor Barat, Komisi bekerja untuk memberi kesempatan bagi warga asal Timor-Leste di Timor Barat untuk memberi pernyataan. Antara Februari dan Agustus 2003, koalisi LSM ini berhasil mengumpulkan 91 pernyataan dari orang-orang asal Timor-Leste yang tinggal di daerah-daerah kota Belu, Kefamenanu, Soe, dan Kupang di Timor Barat.

83. Para pengambil pernyataan di distrik mewawancarai para pemberi pernyataan atau deponen secara perorangan, walaupun anggota keluarga, teman, atau anggota tim dukungan korban dapat juga hadir. Para deponen biasanya adalah korban pelanggaran, walaupun mereka sering juga memberi informasi mengenai pelanggaran terhadap anggota keluarga atau kenalannya, yang banyak di antaranya telah meninggal atau hilang. Para pelaku juga ada yang memberi pernyataan, walaupun tentunya jumlah pernyataan dari mereka jauh lebih sedikit daripada jumlah pernyataan dari korban.

84. Para deponen memberi pernyataan mereka dalam bentuk narasi. Dengan demikian mereka dapat menceritakan kisahnya dalam kata-kata mereka sendiri, dan tidak dipandu oleh serangkaian pertanyaan. Metode ini dipilih karena dapat mendorong para deponen untuk memberi banyak perincian dan informasi mengenai pelanggaran dan keadaan yang meliputi kejadian tersebut. Prosedur ini juga cenderung tidak bersifat mengintimidasi bagi mereka yang tidak biasa menghadapi pertanyaan-pertanyaan dalam situasi resmi.

* Walaupun Rencana Pembangunan Nasional Timor-Leste menyebut 67 subdistrik di negara ini, ketika CAVR dibentuk, sebelum kemerdekaan, terdapat 65 subdistrik yang sudah umum disepakati, yang membentuk dasar strategi operasional Komisi. Tim Pengambilan Pernyataan Komisi mengumpulkan 7.824 pernyataan, meskipun beberapa dari pernyataan tersebut (155 pernyataan) tidak dimasukkan ke dalam *database* Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Human Rights Violation Database, HRVD) untuk analisa kuantitatif karena pernyataan-pernyataan tersebut tidak menyebutkan pelanggaran yang berhubungan dengan mandat Komisi atau pelanggaran yang mereka sebut tidak termasuk dalam periode referensi Komisi: Sebanyak 7.669 pernyataan telah terdaftar dalam HRVD Komisi.

85. Semua pernyataan yang dicatat dikumpulkan di kantor nasional, untuk selanjutnya diperiksa dan diberi kode oleh para pembaca pernyataan, dan dimasukkan ke dalam *database*. Pada proses pencantuman kode, para juru kode membaca dan mengidentifikasi pelanggaran hak asasi dalam setiap pernyataan. Adalah cukup umum bahwa dalam sebuah pernyataan terdapat lebih daripada satu kejadian pelanggaran, atau beberapa pelanggaran dalam satu kejadian. Para pencantun kode akan mengidentifikasi setiap pelanggaran, beserta informasi penting seperti identitas para korban dan pelaku jika diketahui, afiliasi institusi dari pelaku, serta tanggal dan tempat kejadian tersebut.

86. Perincian setiap pelanggaran di dalam pernyataan lalu dimasukkan ke dalam *database* elektronik, yang telah dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan analisa data tersebut. Sebagai contoh, setelah pemasukan seluruh pelanggaran yang teridentifikasi oleh tim pengkode, dapat dilakukan sebuah proses penelusuran untuk mengungkap jumlah keseluruhan dari suatu pelanggaran tertentu; berapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pelaku yang namanya disebut; jumlah serta proporsi pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang dengan afiliasi kelompok tertentu; pengelompokan dan fluktuasi dalam pola-pola pelanggaran dalam kurun waktu tertentu dan di berbagai daerah. Sumber-sumber sekunder tepercaya yang lain, seperti kasus-kasus yang dilaporkan oleh Amnesty International antara 1979 dan 1999, diberi kode dan dimasukkan ke dalam *database*. Metodologi statistik yang digunakan dan langkah-langkah pengaman yang diterapkan untuk memastikan keakuratan data diperinci pada bagian Lampiran dari Laporan ini.

87. Para juru kode pernyataan telah menerima pelatihan yang ekstensif mengenai dasar hukum berbagai pelanggaran hak asasi manusia tertentu yang harus mereka identifikasi. Di dalam pelatihan ini diterangkan mengenai unsur-unsur pelanggaran dan bagaimana menentukan apakah suatu keadaan tertentu memenuhi definisi yang ada. Sebagai contoh, para juru kode pernyataan dilatih untuk menentukan apakah suatu pelanggaran secara hukum memenuhi syarat sebagai penyiksaan ketimbang, misalnya, pelanggaran pidana penyerangan, atau perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan. Mereka juga dilatih untuk menentukan apakah suatu keadaan tertentu memenuhi syarat sebagai perkosaan atau perbudakan seksual.

88. Para juru kode diuji secara berkala untuk keakuratan dan konsistensi. Pada tes semacam ini, para juru kode diminta untuk membaca dan memberi kode pada sebuah kasus perumpamaan untuk melihat apakah mereka telah mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran secara akurat, dan memastikan bahwa sebagian besar anggota tim sepakat mengenai bagaimana sebaiknya mengidentifikasi berbagai pelanggaran. Kategori-kategori di dalam *database* diperingkas jenis pelanggaranannya pada awal proses untuk mencapai konsistensi yang lebih baik di antara para juru kode. Analisis statistik pernyataan-pernyataan tersebut memungkinkan Komisi untuk memenuhi tujuan-tujuan yang digariskan dalam Peraturan No. 10/2001 secara profesional dan objektif. Tujuan-tujuan ini di antaranya:

- Klarifikasi mengenai “latar belakang, situasi yang mendasari, faktor, konteks, alasan, dan pandangan” yang memicu terjadinya pelanggaran skala besar [Bagian 13.1(a)(ii)]
- Menetapkan “sifat” dari pelanggaran hak asasi manusia (yakni jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan) [Bagian 13.1(a)(i)]
- Mengumpulkan dan membandingkan laporan-laporan pelanggaran dari waktu ke waktu dan dari seluruh distrik untuk menentukan luasnya pelanggaran hak asasi manusia (yakni jumlah pelanggaran yang terjadi) [Bagian 13.1(a)(i)]
- Mengumpulkan informasi mengenai pola-pola pelanggaran sehingga dapat menilai apakah terjadi “pola pelanggaran yang sistematis” [Bagian 13.1(a)(i)]
- Menetapkan profil statistik dari “orang-orang, aparat, institusi, dan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia” [Bagian 13.1(a)(iii)]
- Mengumpulkan dan membandingkan data mengenai pola pelanggaran dan pelaku yang terlibat untuk memberi bukti mengenai apakah “pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh perencanaan yang disengaja, kebijakan,” atau atas perintah dari pihak-pihak tertentu dalam konflik [Bagian 13.1(a)(iv)].

Penelitian

89. Program pengambilan pernyataan memungkinkan siapa saja yang mau untuk datang ke Komisi dan melaporkan informasi yang berkenaan dengan konflik politik. Harapannya adalah bahwa dengan membuka jaring informasi yang demikian luas ke distrik-distrik, akan terungkap amat banyak informasi mengenai semua aspek dari 25 tahun konflik. Selanjutnya, hasil analisis akan menyingkap gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi. Pendekatan yang luas dan tidak mengkhususkan pada sasaran tertentu ini berarti bahwa informasi akan didapat mengenai semua aspek konflik politik tersebut, termasuk kejadian-kejadian dan situasi yang sebelumnya belum pernah diketahui luas.

90. Komisi juga mengidentifikasi sepuluh tema utama yang punya makna khusus selama mandat sebagai topik untuk penelitian yang terperinci. Tema-tema ini adalah:

- Kelaparan dan pemindahan paksa
- Struktur, kebijakan, dan praktik pihak militer dan polisi Indonesia
- Struktur, kebijakan, dan praktik pihak Fretilin dan Falintil
- Penahanan dan penyiksaan
- Pembunuhan dan penghilangan paksa
- Anak-anak
- Perempuan
- Konflik politik internal 1974 - 1976
- Peran aktor-aktor internasional dalam proses penentuan nasib sendiri
- Pembantaian.

91. Unit penelitian melakukan lebih daripada 1.000 wawancara yang berfokus pada tema-tema tersebut di atas. Para subjeknya termasuk orang-orang yang telah memainkan peran penting pada berbagai tahapan konflik, serta pelaku dan korban. Para Komisariss dan staf melakukan wawancara ini di Dili, di distrik-distrik, di Portugal, dan di Indonesia. Tema-tema penelitian secara umum bersesuaian dengan tema-tema pada audiensi publik nasional, dan para peneliti juga telah memainkan peran yang penting dalam mengidentifikasi dan berhubungan dengan para korban dan saksi untuk berbicara pada audiensi-audiensi ini. Pada pertengahan 2003, Komisi memulai rangkaian wawancara dengan para tokoh nasional, yang dikenal dengan sebagai wawancara-wawancara VIP. Sebagai tambahan dari kesaksian tentang pengalaman pribadi, wawancara-wawancara ini memudahkan Komisi untuk menginvestigasi latar belakang dan perincian organisasi dan kejadian-kejadian. Komisi melaksanakan 15 wawancara VIP, baik di Timor-Leste maupun Indonesia, termasuk Timor Barat (lihat Lampiran Laporan ini).

92. Sejumlah besar dokumentasi primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema-tema penelitian ini juga telah dikumpulkan. Informasi mengenai konflik telah dikekang selama masa pendudukan militer, sehingga banyak individu menyembunyikan atau menyimpan dokumen-dokumen atau menyelundupkannya ke luar negeri. Komisi telah mengeluarkan permintaan umum untuk mendapatkan segala informasi yang berkenaan dengan mandatnya. Hal ini berhasil mendatangkan berbagai dokumen, rekaman video maupun audio, foto-foto, dan rekaman film kepada Komisi. Materi-materi ini digunakan dalam penulisan Laporan Akhir dan akan menjadi bagian dari arsip permanen.

Audiensi publik

93. Audiensi publik menjadi ciri utama dari program Komisi. Audiensi-audiensi ini turut memenuhi berbagai aspek dari mandat Komisi, termasuk pencarian kebenaran, memajukan rekonsiliasi, dan memulihkan martabat korban. Komisi menyelenggarakan audiensi publik dengan melibatkan peserta dari tingkat akar-rumput sampai tingkat kepemimpinan nasional dan juga para saksi dan ahli internasional. Para saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia memberi kesaksian tentang pengalaman mereka pada audiensi tingkat subdistrik, audiensi nasional, dan audiensi rekonsiliasi komunitas tingkat desa.

Audiensi korban

94. Sebuah audiensi korban diselenggarakan sebagai kegiatan akhir pada setiap program subdistrik, sesuai dengan rencana strategis. Para korban pelanggaran hak asasi manusia diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman mereka, dalam kata-kata dan bahasa mereka sendiri, pada sebuah forum publik. Hal ini membantu memberitahu para anggota komunitas mereka yang lebih luas mengenai penderitaan yang telah mereka alami. Audiensi semacam ini juga membantu memulihkan sebagian martabat mereka yang hilang, dengan mendorong pengakuan atas

perjuangan dan kontribusi mereka. Audiensi korban juga memberi kesempatan bagi semua anggota komunitas untuk mendengar mengenai kejadian-kejadian semasa konflik yang sebelumnya tidak diketahui khalayak ramai. Hal ini membantu memupuk rasa solidaritas antara korban dan komunitasnya. Ini juga turut membantu mengklarifikasi sejarah lokal mengenai konflik, dan memperkuat tekad bahwa kejadian-kejadian menyakitkan di masa lalu tidak boleh terulang lagi.

Audiensi publik nasional

95. Komisi menyelenggarakan delapan audiensi publik nasional. Audiensi-audiensi ini disiarkan melalui televisi di Dili dan melalui radio secara nasional, serta diliput luas oleh pers lokal. Perwakilan dari media mancanegara turut hadir pada beberapa audiensi yang diselenggarakan.

96. Nilai dari audiensi-audiensi tematis ini terletak pada penyajian pandangan berbagai saksi dan ahli kepada seluruh penduduk. Kedelapan audiensi nasional tersebut dipimpin oleh tujuh Komisariss Nasional. Walau pencarian kebenaran merupakan salah satu tujuannya, juga diakui bahwa program tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang akan membantu rekonsiliasi nasional dan penghargaan kepada hak-hak para korban.

97. Para Komisariss menanyakan para saksi sesuai kesaksian mereka, tapi waktu yang tersedia untuk klarifikasi dengan cara ini cukup terbatas sehingga tidak ada penentuan atau temuan yang dibuat pada akhir dari audiensi-audiensi ini. Komisi mengakui bahwa pengambilan pernyataan dan wawancara yang mendalam merupakan cara yang lebih dapat diandalkan untuk mengumpulkan informasi, ketimbang audiensi publik. Namun, audiensi-audiensi ini sering menambah informasi penting kepada data yang dimiliki Komisi.

98. Audiensi publik memberi kesempatan yang langka bagi kalangan umum untuk mengetahui tentang aspek-aspek penting dari konflik politik. Audiensi-audiensi ini juga memberi kesempatan kepada para saksi untuk mengungkapkan pandangan mereka dan menceritakan pengalaman mereka dalam forum yang resmi. Komisi sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang terkait berbagai isu dan pihak dalam konflik diketengahkan dengan seimbang. Pemilihan para saksi dilakukan dengan prinsip keseimbangan, dengan mengumpulkan kesaksian dari laki-laki maupun perempuan, dari berbagai distrik di Timor-Leste, mengenai periode-periode konflik yang berbeda dan yang berkaitan dengan kelompok pelaku yang berbeda.

99. Audiensi-audiensi memberi kesempatan pertama kepada para korban kekerasan oleh pasukan keamanan Indonesia untuk berbicara secara terbuka mengenai kejadian-kejadian ini tanpa rasa takut akan balas dendam. Sejalan dengan tujuan memberi gambaran yang seimbang, jumlah terbesar para saksi dan korban memberi kesaksian mengenai kekerasan yang dilakukan oleh para anggota pasukan pendudukan Indonesia. Pengambilan pernyataan dan program penelitian telah menunjukkan bahwa para pelaku yang terkait dengan pasukan

pendudukan Indonesia telah melakukan sebagian besar pelanggaran selama periode mandat.

100. Para korban diberi kesempatan untuk berbicara dengan terbuka mengenai pengalaman mereka, termasuk menelaah hal-hal yang menyakitkan, “luka-luka lama” yang sebelumnya tertutup. Komisi berkeyakinan bahwa meskipun membuka luka-luka lama membawa risiko tertentu, namun mengungkap kebenaran di hadapan publik sangatlah penting. Menyingkap kejadian-kejadian yang telah lama buram, sehingga mendorong debat nasional, akan membantu menyelesaikan perselisihan yang ada dan amarah yang masih terpendam. Audiensi-audiensi ini menjadi pengalaman yang sangat emosional bagi mereka yang memberi kesaksian dan bagi khalayak ramai yang menyaksikan dan mendengarkan cerita mereka.

101. Audiensi publik nasional pertama diadakan pada 11-12 November 2002, bertepatan dengan peringatan pembantaian Santa Cruz 1991. Audiensi ini dikenal sebagai Audiensi Korban, dan diberi judul “Dengarkanlah Suara Kami” (*Rona Ami Nia Lian*). Tidak seperti audiensi-audiensi nasional berikutnya, audiensi ini tidak berfokus pada suatu tema atau jenis pelanggaran khusus, tapi lebih pada mengumpulkan para korban dari semua distrik di Timor-Leste yang memberi kesaksian tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama 25 tahun periode mandat. Ketujuh audiensi nasional yang menyusul kemudian diselenggarakan sesuai tema-tema tertentu.

102. Audiensi publik nasional bertema diadakan menurut jadwal berikut ini:

- 17 - 18 Februari 2003 – Pemencaraan, Penahanan, dan Penyiksaan Politik
- 28 - 29 April 2003 – Perempuan dan Konflik
- 15 - 18 Maret 2004 – Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional
- 28 - 29 Juli 2003 – Kelaparan dan Pemindahan Paksa
- 19 - 21 November 2003 – Pembantaian massal
- 15 - 18 Desember 2003 – Konflik Politik Internal 1974 - 1976
- 29 - 30 Maret 2004 – Anak-anak dan Konflik.

Penelitian angka kematian

103. Pada Juni 2003, Komisi memulai penyelidikan statistik mengenai jumlah orang Timor-Leste yang meninggal sebagai akibat langsung dari konflik, apakah sebagai akibat pencabutan hak-haknya, dalam pertempuran, terkena tembakan, atau sebagai korban pembunuhan tidak sah atau penghilangan paksa. Walaupun sebelumnya sudah pernah ada usaha untuk memperkirakan angka kematian dari penyebab-penyebab seperti ini, penelitian ini merupakan kesempatan pertama sebuah organisasi melakukan penelitian objektif mengenai angka kematian selama konflik.

104. Proyek ini dirancang dan dilaksanakan dalam kerjasama dengan Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) atau Kelompok Analisis Data Hak Asasi Manusia,

organisasi internasional yang mengkhususkan diri pada analisis statistik hak asasi manusia dan telah berpengalaman dalam bidang ini dengan beberapa komisi kebenaran sebelumnya.* Analisisnya didasarkan pada tiga set data independen:

- informasi yang terkandung dalam sekitar 8.000 pernyataan yang telah dikumpulkan, diberi kode, dan dimasukkan ke dalam *database* Komisi
- sebuah Sensus Kuburan yang didasarkan pada penghitungan batu nisan di 492 perkuburan di Timor-Leste
- sebuah Survei Tingkat Kematian Retrospektif (berlaku surut), yang dirancang oleh HRDAG. Kemudian dilakukan survei mendalam terhadap anggota keluarga 1.322 rumah tangga yang dipilih secara acak di 121 *aldeia* (dusun) dari seluruh wilayah negara. Survei ini menggunakan daftar pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan angka kematian, seperti tanggal, situasi, dan penyebab kematian anggota keluarga selama masa konflik.

105. Penerapan teknik statistik pada kelompok data yang berbeda ini, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya, berhasil mendapatkan perkiraan mengenai angka kematian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

106. Metodologi dan hasil-hasil proyek analisis statistik mengenai angka kematian ini, serta analisis statistik dari pelanggaran tidak fatal yang diselidiki oleh Komisi, terdapat pada Lampiran dari Laporan ini.

Submisi

107. Komisi menerima sejumlah submisi tertulis dari Timor-Leste dan individu-individu dan organisasi yang berbasis di luar negeri. Termasuk di antaranya dokumen-dokumen asli, laporan-laporan, dan analisis yang menerangkan kejadian-kejadian selama periode mandat, serta foto-foto dan rekaman film dari masa itu (lihat bagian berikutnya, 1.5.1.6).

108. Komisararis Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia memberi sebuah submisi yang sangat berarti kepada Komisi, dalam bentuk sebuah laporan konsultasi mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste pada 1999. Penulis laporan ini, Profesor Geoffrey Robinson dari Universitas California, Los Angeles, memiliki akses terhadap materi-materi rahasia yang dimiliki oleh misi UNTAET dan UNMISSET (United Nations Mission of Support in East Timor, Misi Pendukung PBB di Timor-Leste) serta Unit Investigasi Kejahatan Berat. Laporan ini sebelumnya belum dibuka untuk umum oleh Kantor Komisararis Tinggi untuk Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) pada saat Komisi menyiapkan Laporannya. Salinannya disertakan dalam Lampiran dari Laporan ini.

* HRDAG melaksanakan analisis statistik dengan komisi kebenaran lain seperti di Afrika Selatan, Guatemala, dan Peru. Lihat lebih lengkap di bagian Pertanggungjawaban di Lampiran dalam Laporan ini.

109. Daftar lengkap submisi yang pernah diterima oleh Komisi terdapat pada Lampiran dari Laporan ini.

Sumber-sumber informasi

110. Komisi mengeluarkan panggilan kepada semua orang dan organisasi yang memiliki dokumen-dokumen yang relevan agar meneruskan materi-materi tersebut ke CAVR. Kemudian dokumen-dokumen ini dapat dipertimbangkan dalam penyusunan cerita yang akurat mengenai apa yang telah terjadi. Sebagai akibatnya, Komisi menerima bahan-bahan dan submisi dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia yang sebelumnya pernah terlibat dalam gerakan solidaritas internasional untuk Timor-Leste, dari Portugal, Indonesia, Australia, wilayah Asia, Amerika Serikat, dan Eropa. Organisasi-organisasi internasional seperti Catholic Relief Services of the USA dan Australian Council for Overseas Aid (ACFOA), juga menyediakan materi berharga yang bersumber dari panjangnya keterlibatan mereka dengan Timor-Leste selama periode mandat.

111. Berbagai bahan juga dengan mudah diberikan oleh para korban dan saksi warga Timor-Leste, pemimpin nasional dan pemuka setempat, dan organisasi-organisasi non-pemerintah, khususnya Yayasan HAK dan Fokupers (Forum Komunikasi Perempuan Timor-Leste). Koleksi dari mendiang Profesor Herb Feith telah disumbangkan kepada arsip Komisi setelah ia meninggal pada 2003.

112. Sejumlah orang Indonesia memberi kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional dan menyediakan submisi tertulis. Anggota Komisi Nasional Perempuan Indonesia dan sekelompok LSM dari Timor Barat (Indonesia), Tim Kemanusiaan Timor Barat, membuat submisi pada Audiensi Publik CAVR tentang Perempuan dan Konflik. Lembaga hak asasi manusia Indonesia, Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), membuat dua submisi kepada CAVR: yang satu mengungkapkan penelitian terperinci terhadap struktur dan operasi militer Indonesia, dan yang lain adalah testimoni dari perwira militer Indonesia dan keluarga mereka, berjudul “Cerita dari Garis Belakang”. Selain itu sejarawan Indonesia Asvi Warman Adam dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyampaikan kesaksiannya dengan judul “Sejarah Timor-Leste dalam Indonesia Baru” dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional. Sejumlah pekerja dan aktivis HAM lainnya juga memberikan kesaksian pada audiensi tersebut dan kesaksian mereka telah digunakan dalam bab-bab yang relevan dalam Laporan ini.

113. Komisi tidak begitu berhasil mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai pemerintah, yang memberi tanggapan berbeda-beda kepada Komisi. Komisi pernah menulis kepada pemerintah dan lembaga-lembaga yang disebut dalam Laporan ini di bab 7.1: Hak penentuan nasib sendiri, untuk meminta dan mendengar pendapat mereka. Komisi mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Presiden Indonesia, Perdana Menteri Portugal dan Australia, Pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Republik Rakyat Cina, dan Kerajaan Inggris. Tidak ada jawaban

resmi yang diterima tetapi Komisi menerima bantuan dari beberapa perwakilan dari pemerintah tersebut yang berada di Timor-Leste. Komisi juga mencaritahu mengenai akses terhadap dokumentasi di Moskow dan Vatikan.

114. Komisi juga menulis kepada individu-individu dari pemerintahan terdahulu, termasuk Presiden Jimmy Carter dari Amerika Serikat, para mantan menteri dan pejabat pemerintah termasuk mantan Perdana Menteri Australia Gareth Evans dan mantan Duta Besar Richard Woolcott, serta sejumlah mantan pejabat Indonesia. Jawaban yang diterima sangat beragam dan beberapa bahan diterima sebagai hasil dari permintaan ini.

115. Selain menulis ke Presiden Megawati Sukarnoputri untuk mencari informasi, tetapi tidak ada tanggapan, Komisi juga mengundang beberapa mantan pemimpin dan pejabat Indonesia untuk memberi kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional: Mantan Presiden B.J. Habibie; Mochtar Kusumaatmaja, mantan Menteri Luar Negeri pada pemerintahan Soeharto; Dewi Fortuna Anwar, penasihat luar negeri Presiden B.J. Habibie; Frans Seda, mantan menteri pada kabinet Soeharto; Francisco Lopes da Cruz, mantan Duta Besar Keliling Khusus Masalah Timor-Leste untuk Presiden Soeharto; Jusuf Wanandi, dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), tidak seorang pun yang bisa memberikan kesaksian, tetapi Jusuf Wanandi menyediakan sebuah kesaksian yang dibacakan atas nama dia.

116. Masalah umum yang dihadapi baik oleh beberapa pemerintah dan Komisi adalah hambatan dalam menemukan catatan-catatan yang telah berusia 30 tahun. Dalam sebagian besar kasus, suatu pencarian yang menyeluruh masih harus dilakukan, dan dalam kasus ketiadaan undang-undang kebebasan informasi atau bila akses sangat terbatas, pencarian itu mungkin tidak akan berhasil.

117. Namun, keputusan beberapa pemerintah untuk melepaskan beberapa catatan rahasia mereka tentang Timor-Leste telah banyak membantu Komisi untuk menggenapi tanggung jawabnya dalam menetapkan kebenaran. Dokumentasi yang dilepaskan oleh Pemerintah Australia untuk periode 1974 - 1976 dan dua volume tentang *Relatórios da Descolonização de Timor* pada 1974 - 1975 yang dibuat oleh Pemerintah Portugis, keduanya sangat bernilai. Komisi juga diuntungkan dengan dibukanya beberapa catatan rahasia oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan dari Perpustakaan Kepresidenan Ford dan Carter kepada National Security Archive, empat volume bahan yang tidak dirahasiakan lagi dari Pemerintah Selandia Baru; dan beberapa dokumen yang dilepas oleh Kerajaan Inggris yang disediakan kepada Komisi oleh Hugh Dowson. Komisi juga secara intensif berhasil menarik catatan tentang debat informatif dan beberapa audiensi tentang Timor-Leste yang dilaksanakan di PBB, di Kongres AS, dan koleksi Parlemen Australia tentang dokumen dasar masalah Timor yang diedit oleh Heiki Krieger dan dipublikasikan oleh Universitas Cambridge. Semua dokumen tersebut juga diperkaya dengan kesaksian secara tertulis dan lisan yang diberikan kepada Komisi oleh para mantan diplomat yang bekerja di PBB, Pemerintah AS, dan Australia.

Rekonsiliasi Komunitas

118. Semua aspek kerja Komisi dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian dari pendekatan yang terkoordinasi dan terpadu dengan tujuan untuk mendorong rekonsiliasi.

119. Pertikaian yang terus berlanjut mengenai fakta-fakta sejarah, serta pengingkaran terhadap fakta-fakta tersebut mencegah pihak-pihak yang terlibat konflik menemukan dasar yang sama untuk memulai proses rekonsiliasi yang menyakitkan, sulit, dan perlahan. Berbagai aktivitas pencarian kebenaran dimaksudkan untuk menguak sejarah berbagai peristiwa yang didasarkan pada informasi yang objektif, alih-alih pada kabar burung atau propaganda. Versi kebenaran yang memiliki dasar yang kuat seperti ini pada gilirannya dapat membuka jalan bagi pengakuan tanggung jawab, sehingga akan memungkinkan terjadinya penerimaan dan pemaafan.

120. Aspek dukungan korban dari kerja Komisi juga meletakkan fondasi bagi rekonsiliasi dengan maksud untuk mendefinisikan kembali hubungan di antara korban, pelaku, dan komunitasnya. Pengembalian martabat yang pernah direnggut dari para korban meredakan kemarahan yang terpendam dan memungkinkan para korban untuk beranjak kepada penerimaan dan pemaafan terhadap orang-orang yang telah merugikan atau menyakiti mereka.

121. Program utama yang mendukung mandat rekonsiliasi Komisi adalah Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK) seperti yang tercantum dalam Bagian IV dari regulasi. Tujuan program tersebut adalah untuk menawarkan sebuah penyelesaian hukum terhadap berbagai kejahatan “ringan” yang dilakukan selama konflik, membantu para pelaku kembali ke masyarakatnya, dan membangun kembali hubungan antara korban, pelaku, dan komunitasnya.

122. Belum pernah ada kegiatan serupa yang bisa dijadikan contoh untuk PRK, di Timor-Leste atau di tempat lain. Prosedur Rekonsiliasi Komunitas banyak mengambil praktik peradilan tradisional selain juga prinsip-prinsip arbitrase dan mediasi, serta aspek-aspek hukum pidana dan perdata sebagai acuannya. Berbagai pandangan yang diungkapkan selama konsultasi komunitas yang dilaksanakan oleh Komite Pengarah sangat memengaruhi rancangan program. Ini terlihat dalam keputusan untuk memasukkan unsur-unsur seperti praktik-praktik spiritual setempat, pengakuan dan pemaafan, dan partisipasi para pemimpin setempat. Para korban juga diberi kesempatan untuk berhadapan dan berbicara langsung dengan para pelaku, sementara para pelaku diwajibkan untuk mengakui dan meminta maaf kepada korban dan komunitasnya. Akhirnya rancangan tersebut menjalin hubungan langsung yang resmi dengan Kejaksaan Agung dan Pengadilan-pengadilan Distrik di Timor-Leste.

123. Regulasi menyebutkan bahwa para pelaku kejahatan “ringan” dan “tindakan yang merugikan” berkaitan dengan konflik politik diizinkan datang ke Komisi dan memberikan pernyataan yang menjelaskan secara lengkap kejadian seputar tindakan mereka. Tindakan-tindakan seperti pembakaran rumah, penjarahan, dan pemukulan adalah jenis kasus yang layak ditangani oleh PRK, namun ‘kejahatan

berat' seperti pembunuhan, perkosaan, dan penyiksaan tidak termasuk. Setelah membantu deponen melengkapi pernyataannya, Komisi meneruskannya kepada Kejaksaan Agung, yang akan memutuskan apakah kasus itu dapat dilanjutkan melalui PRK dan tidak melalui penuntutan.

124. Sebuah panel yang terdiri atas tiga sampai lima pemimpin setempat diketuai oleh Komisararis Regional kemudian dipilih untuk memimpin audiensi di komunitas deponen. Formatnya cukup fleksibel untuk memberi ruang bagi praktik-praktik spiritual dan praktik adat lainnya yang khas bagi komunitas tersebut. Pelaku diminta mengakui kesalahannya di muka umum dan para korban dapat secara langsung bertanya dan memberitahu pelaku dampak yang dialaminya akibat tindakan mereka. Anggota komunitas dapat mengajukan pertanyaan mengenai pernyataan pelaku dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Tanya-jawab ini sering memanas, tapi tidak pernah menimbulkan kekerasan. Audiensi-audiensi ini merupakan kegiatan komunitas yang sangat khusus, dan biasanya berlangsung dari pagi hingga larut malam. Beberapa audiensi yang melibatkan banyak pelaku berlangsung selama beberapa hari.

125. Ketika semua masalah yang relevan telah ditelusuri, panel kemudian memperantarai kesepakatan melalui konsultasi dengan para korban dan pelaku. Si pelaku harus melakukan 'aksi rekonsiliasi' tertentu agar dirinya dapat diterima kembali ke dalam komunitasnya. Aksi-aksi ini dapat berupa kerja bakti dan pemberian uang, ternak, atau benda-benda lain kepada korban. Persetujuannya didaftarkan kepada Pengadilan Distrik yang berwenang, dan setelah memenuhi semua tindakan yang disyaratkan, pelaku mendapat kekebalan dari tuntutan pidana dan perdata di masa mendatang untuk pelanggaran-pelanggaran yang diakuinya.

126. Program PRK dimulai secara perlahan, sebagian karena ketidakjelasan di tingkat lokal mengenai sifat dari proses tersebut. Ketika berita mengenai audiensi yang pertama menyebar, permintaan meningkat. Pada akhirnya, 1.379 pelaku berhasil menyelesaikan audiensi PRK, jauh di atas target awalnya yaitu 1.000. Karena semua kasus di suatu desa biasanya didengar pada saat yang sama, jumlah audiensi yang sebenarnya adalah 216. Diperkirakan 40.000 anggota komunitas hadir dan berpartisipasi dalam berbagai audiensi.

127. Penilaian yang dilakukan oleh Komisi menunjukkan bahwa program PRK membuat sebuah kontribusi penting ke arah rekonsiliasi. Para pelaku, korban, dan peserta lainnya menyatakan bahwa audiensi telah memberikan kesempatan bagi seluruh komunitas untuk menelusuri dan mengklarifikasi berbagai kejadian lokal yang terkait konflik politik dan pengaruhnya pada penduduk. PRK membantu para pelaku agar diterima kembali. Hal ini memungkinkan mereka untuk mulai bekerja lagi dan berinteraksi dengan tetangga alih-alih bersembunyi, dalam ketakutan dan antisipasi terhadap ancaman dan kemungkinan kekerasan.

128. Para korban yang menanggapi survei mengatakan bahwa PRK telah membantu meredakan kemarahan mereka dengan memberi mereka kesempatan untuk mengungkapkannya secara langsung kepada pelaku yang pernah merugikan mereka.

Hal ini membuat mereka mampu berbesar hati dan memaafkan, dengan syarat adanya ungkapan rasa bersalah dan penyesalan yang sungguh-sungguh oleh pelaku. Dengan memberikan solusi kepada setiap kasus yang berpotensi menyebabkan kekerasan dan balas dendam di daerah tempat tinggal mereka, PRK memberi sumbangan penting dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas pada saat kedua pihak sedang dalam keadaan paling rentan. Bagian 9: Rekonsiliasi komunitas dari Laporan ini memberikan gambaran dan analisis yang lebih lengkap mengenai Prosedur Rekonsiliasi Komunitas.

129. Program radio mingguan Komisi menyiarkan liputan sejumlah besar audiensi rekonsiliasi komunitas, dan juga diskusi mengenai isu-isu yang muncul dari audiensi nasional dan masalah lain terkait dengan rekonsiliasi.

Penerimaan dan dukungan korban

130. Divisi Penerimaan (*Acolhimento*) dan Dukungan Korban berpegang pada prinsip bahwa para korban pelanggaran hak asasi manusia harus menjadi perhatian utama kerja Komisi. Divisi ini berupaya mengembangkan dan melaksanakan cara-cara praktis untuk mendukung para korban dan meningkatkan pengakuan dan penghormatan terhadap mereka.

131. Komisi menerapkan program-program dukungan korban baik yang bersifat publik maupun pribadi. Audiensi publik dan program informasi membantu memperbaiki hubungan dan mendorong saling pengertian antara korban dan komunitasnya dengan memberi kesempatan bagi korban untuk menceritakan pengalaman mereka. Lokakarya pemulihan lebih bersifat pribadi, memusatkan perhatian pada kebutuhan pribadi para korban dengan bekerja bersama kelompok orang yang pernah mengalami trauma yang serupa.

132. Staf Penerimaan dan Dukungan Korban melakukan berbagai kegiatan berikut:

- Memonitor kesejahteraan pengungsi yang baru kembali ke Timor-Leste. Kegiatan ini mencakup identifikasi dan tindak lanjut terhadap kasus-kasus, melalui pemecahan masalah bekerjasama dengan organisasi urusan pengungsi, seperti UNHCR
- Menyelenggarakan pertemuan publik untuk memberitahu masyarakat mengenai kerja Komisi dan untuk memperoleh berbagai tanggapan dan rekomendasi
- Mendukung para korban pelanggaran HAM yang berpartisipasi dalam program Komisi baik dengan memberikan pernyataan, kesaksian dalam audiensi publik, menghadiri proses rekonsiliasi komunitas, atau berpartisipasi dalam lokakarya pemulihan
- Memfasilitasi berbagai diskusi kelompok dan mencatat sejarah lokal dengan memusatkan perhatian pada dampak pelanggaran HAM di setiap komunitas

- Membantu para korban dengan kebutuhan mendesak dengan menilai kasus-kasus mereka, merujuk mereka kepada organisasi yang tepat, dan memberikan bantuan keuangan sekadarnya, sebagai bagian dari rencana Reparasi Darurat Komisi

133. Bagian 10: *Acolhimento* dan dukungan korban dari Laporan ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kerja Divisi ini.

Laporan akhir

134. Bagian 13.1(c) dari Regulasi menetapkan untuk “menyiapkan sebuah laporan lengkap yang menggambarkan kegiatan dan temuan, berdasarkan informasi yang faktual dan objektif dan bukti yang dikumpulkan atau diterima atau diberikan pada Komisi”. Bagian 21 secara spesifik memerinci tugas-tugas Komisi dalam pemenuhan fungsi ini. Sub-bagian 21.1 menyatakan bahwa Komisi “harus menyusun dan menyerahkan kepada Presiden suatu laporan akhir yang didasarkan pada informasi yang telah dikumpulkan oleh Komisi.” Sub-bagian 21.2 menyatakan bahwa Komisi harus “merangkum berbagai temuan Komisi dan membuat rekomendasi berkaitan perubahan hukum, politik, administratif, atau lainnya yang harus diambil untuk mencapai tujuan Komisi untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan menanggapi kebutuhan korban pelanggaran hak asasi manusia.” Sub-bagian 21.3 menyatakan bahwa laporan yang dibuat oleh Komisi harus segera tersedia kepada umum dan diterbitkan dalam Lembaran Negara, dan sub-bagian 21.4 menyatakan bahwa Presiden “mempertimbangkan semua rekomendasi yang diajukan oleh Komisi dalam laporan akhir dengan tujuan menjalankannya.”

135. Persiapan dan diseminasi laporan akhir yang menyeluruh merupakan tujuan inti dari mandat Komisi. Perencanaan untuk hal ini dimulai segera setelah retret Komisariss Nasional pertama di Maubara pada Januari 2002. Pada retret berikutnya di Dare pada Mei 2003, struktur Laporan Akhir dibahas dan persetujuan sementara diberikan.

136. Penyelesaian Laporan Akhir merupakan tugas yang sangat sulit bagi semua yang terlibat. Tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu berdampak berat bagi banyak kontributor Laporan ini. Kerja yang telah selesai merupakan penghargaan yang kekal atas dedikasi dan komitmen mereka.

137. Mandat Komisi sangatlah luas, termasuk beragam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama periode 25 tahun 6 bulan, dimulai dari 25 April 1974 sampai 25 Oktober 1999 seperti tercantum dalam Regulasi nomor 10/2001. Proses penulisan melibatkan sebuah upaya kerjasama antardivisi. Tim-tim peneliti menghasilkan rangkuman tematis berdasarkan wawancara dan sumber-sumber sekunder. Kekayaan informasi di *database* pelanggaran HAM menghasilkan informasi untuk menentukan pola-pola, untuk mengidentifikasi sejumlah pelanggaran yang dilaporkan yang melibatkan pelaku tertentu, untuk menentukan afiliasi institusi pelaku, dan untuk menyediakan profil korban. Hal ini memberikan cara praktis bagi para penulis untuk mengidentifikasi dan mengakses pernyataan-

pernyataan asli yang berhubungan dengan subjek-subjek yang ditulisnya. Survei angka kematian menghasilkan informasi mengenai tingkat dan penyebab kematian yang terjadi selama periode mandat.

138. Kerumitan menghasilkan Laporan dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Portugis, dengan versi populer dalam bahasa Tetum, sangat akut. Kerumitan ini akibat kebijakan Komisi untuk menghasilkan Laporan Akhir dalam bahasa-bahasa tersebut. Karena tim penulis dan editor bekerja dalam bahasa Inggris dan Indonesia, perlu untuk selalu menyediakan salinan rancangan bagian-bagian dan bab-bab terkini dalam kedua bahasa tersebut. Setiap tim penulis, yang biasanya terdiri atas dua anggota orang Timor-Leste dan seorang anggota staf internasional, diberi tanggung jawab untuk membuat rancangan bagian dan bab-bab. Rancangan-rancangan ini kemudian diterjemahkan dan diserahkan kepada tim penyunting (editorial). Versi yang telah disunting kemudian diterjemahkan lagi dan diserahkan kepada Komisararis Nasional untuk dipertimbangkan. Bagian-bagian dan bab-bab ini dibahas, perbedaan substantif-politis diperdebatkan, dan berbagai perubahan direkomendasikan (lihat di atas, 1.4.2, Tantangan bahasa, paragraf 64 - 64).

139. Tim editorial kemudian bertanggung jawab untuk membuat berbagai perubahan yang direkomendasikan. Sebuah kelompok kerja yang lebih kecil, yang terdiri atas Komisararis dan staf, mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis, misalnya apakah istilah-istilah yang diterjemahkan telah secara akurat sesuai dengan naskah yang telah disetujui. Mereka juga memecahkan ketidakkonsistenan di dalam atau di antara bagian-bagian Laporan. Tim pengecek fakta bertanggung jawab mengecek bahwa semua perincian yang ada dalam draf sudah akurat, berdasarkan berbagai pernyataan dan bahan-bahan yang ada. Selanjutnya dilakukan sebuah proses penyuntingan teknis, saat naskah diperiksa konsistensinya dengan gaya bahasa yang telah ditetapkan dan referensi silang dimasukkan.

140. Regulasi mensyaratkan semua keputusan Komisi harus diambil berdasarkan konsensus atau, bilamana konsensus tidak dapat dicapai, dengan persetujuan mayoritas dari ketujuh Komisararis. Mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang bersifat sensitif antara tujuh individu merupakan tugas yang tidak sederhana. Meminta konsensus mengenai penggunaan istilah-istilah tertentu dapat menjadi kendala bagi kemajuan Laporan, khususnya bila ada kata atau istilah suatu bahasa yang dapat secara akurat mencerminkan kehendak dari Komisi tidak memiliki padanan yang tepat ketika diterjemahkan ke dalam salah satu dari dua bahasa lainnya dalam penerbitan Laporan.

141. Komisi mempertimbangkan bahwa Komisi dimandatkan untuk menyampaikan Laporan Akhirnya dalam salah satu bahasa resmi negara ini. Karena keterbatasan yang dimiliki dalam bahasa Tetum, maka dipilihlah bahasa Portugis. Penerjemahan Laporan Akhir ke bahasa Portugis menuntut lebih banyak waktu dan proses *review* serta verifikasi oleh para Komisararis Nasional. Pemerintah Portugis memberikan bantuan dengan menyediakan seorang ahli bahasa Portugis, Paula Pinto, untuk menjamin terpenuhinya standar terjemahan. Komisi berharap bahwa Laporan Akhir ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Tetum, ketika sumberdaya dan kapasitas teknik tersedia.

142. Sebagai tambahan pada versi resmi Laporan Akhir yang lengkap, Komisi telah membuat versi-versi laporan yang dapat lebih luas diakses. Sebuah versi film dokumenter berdurasi dua-setengah jam telah diproduksi dalam bahasa Tetum, dengan terjemahan dalam bahasa Inggris, Portugis, dan Indonesia, demikian juga versi radio bahasa Tetum, eksibisi fotografi, dan serial buklet mengenai tujuh audiensi publik tematis nasional dalam bahasa Tetum, Indonesia, dan Inggris. Sebuah eksibisi fotografi tentang para korban yang selamat dari pelanggaran dilaksanakan untuk menghormati harga diri dan aspirasi mereka, bersama penerbitan buku fotografi tentang *survivor* (korban yang selamat) yang mengekspresikan harapan untuk masa depan. Komisi percaya bahwa laporan dan bahan penelitian terkait di Arsip Comarca memberikan sumber bahan yang kaya yang dapat menjadi dasar untuk menghasilkan materi pengajaran mengenai HAM, rekonsiliasi, dan sejarah Timor-Leste yang mudah diakses.

143. Komisi membentuk sebuah tim kampanye Laporan Akhir, yang sejak pertengahan 2004 melaksanakan perjalanan ke seluruh distrik untuk membagi informasi tentang proses penulisan Laporan Akhir. Tim ini mempertontonkan video hasil kerja Komisi dan melaksanakan diskusi kelompok di seluruh distrik, sebagai pembuka jalan untuk diseminasi Laporan Akhir.

Arsip

144. Komisi diberi mandat untuk memelihara arsip-arsip dan catatan-catatannya untuk referensi masa depan dan memberi pertimbangan tentang apakah bahan-bahan tersebut akan tersedia secara terbuka bagi masyarakat Timor-Leste, menentukan aturan-aturan yang diperlukan untuk menyediakan perlindungan bagi informasi rahasia, dan aturan-aturan yang diperlukan untuk memberi rasa aman bagi orang-orang yang telah memberi kesaksiannya kepada Komisi (Regulasi UNTAET Bagian 43.2). Pada April 2004, ketika kantor nasional mengalami restrukturisasi, Divisi Arsip dan Comarca didirikan untuk mengamankan arsip-arsip dan perpustakaan Komisi. Divisi ini juga diberi tanggung jawab untuk merencanakan penggunaan Comarca di Balide sebagai pusat memorial untuk korban, hak asasi manusia, dan rekonsiliasi.

145. Tim Arsip dan Comarca terdiri atas empat anggota staf yang dibantu para pustakawan relawan, dengan seorang spesialis pengarsipan internasional sebagai penasihat. Karena di Timor-Leste tidak ada kader terlatih dalam bidang manajemen informasi yang berspesialisasi dalam menjalankan pengarsipan, prioritas pertama divisi ini adalah pembangunan kapasitas.

146. Arsip ini mencakup seluruh dokumentasi dari program pencarian kebenaran, rekonsiliasi komunitas, *acolhimento* dan dukungan korban, serta arsip administrasi yang berhubungan dengan keuangan, hukum, dan manajemen strategis. Terdapat lebih daripada 7.740 rekaman pernyataan dari proses pencarian kebenaran, lebih daripada 1.000 wawancara penelitian, lebih daripada 1.541 pernyataan rekonsiliasi komunitas, ratusan jam rekaman digital dan audio dari audiensi publik, dan ribuan

laporan penelitian dan materi-materi terkait. Koleksi foto dan rekaman video, serta arsip audio yang lengkap dari program radio mingguan Komisi juga disimpan dalam Arsip ini.

147. Sedangkan di perpustakaanya terdapat lebih daripada 2.500 judul, terutama buku-buku dan artikel-artikel tentang Timor-Leste, Indonesia, studi hak asasi manusia, dan perdamaian, dalam bahasa Tetum, Portugis, Indonesia, Inggris, dan bahasa lainnya.

148. Arsip Comarca adalah anggota pendiri Asosiasi Perpustakaan dan Informasi Timor-Leste (ABITL), yang pertemuan perdananya diadakan di Comarca. Pemerintah telah setuju bahwa Arsip Komisi harus terus dipelihara di Comarca. Arsip CAVR memiliki hubungan erat dengan Arsip Nasional Timor-Leste yang dijalankan negara.

149. Direncanakan untuk mengadakan sebuah eksibisi permanen yang berkaitan dengan Laporan Akhir Komisi dan ini akan bertempat di Pusat Arsip dan Dokumentasi Comarca.

Kewajiban Komisi terhadap para peserta dalam program-program intinya

Kerahasiaan

150. Seluruh pernyataan perorangan dijaga kerahasiaannya. Setiap orang yang memberikan pernyataan diminta persetujuannya mengenai penggunaan bahan dari pernyataannya dalam Laporan Akhir Komisi. Mereka juga ditanyai apakah warga Timor-Leste dapat mengakses pernyataan mereka setelah periode mandat Komisi berakhir. Para saksi dapat memilih untuk memberikan informasi secara rahasia; secara anonim, dengan tidak mencantumkan identitas diri dan identitas orang-orang yang disebut dalam pernyataan mereka; atau sesuai pilihan lain yang mereka inginkan berkaitan dengan penggunaan pernyataan mereka. Pemberi pernyataan diberitahu bahwa akses staf Komisi terhadap informasi yang tercantum dalam pernyataan mereka akan dibatasi, dan bahwa Komisi akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dokumen. Regulasi mewajibkan seluruh Komisaris, staf, dan orang-orang yang bekerja atas nama Komisi untuk “memelihara dan menjaga” kerahasiaan dari semua materi yang rahasia. Mereka yang diketahui telah membocorkan informasi rahasia dan melanggar kewajiban-kewajiban yang diperinci dalam Regulasi, dapat dikenai sanksi pidana.⁴

Hak-hak para deponen dalam PRK

151. Adalah kebijakan Komisi untuk memastikan bahwa seluruh pendaftar Prosedur Rekonsiliasi Komunitas memahami implikasi dari tindakan mereka memberikan pernyataan. Karena itu, mereka diberitahu bahwa pernyataan tersebut akan diteruskan ke Kejaksaan Agung dan dapat digunakan dalam proses hukum di masa

depan. Jika memungkinkan, informasi ini akan diberikan kepada para deponen dalam bahasa setempat.

Perlindungan saksi

152. Semua langkah praktis telah diambil untuk menjamin keselamatan para saksi. Polisi hadir di setiap audiensi publik dan tindakan yang diperlukan telah diambil dalam keadaan di mana para saksi mungkin terancam. Para saksi diberitahu mengenai haknya untuk memberikan informasi secara rahasia. Bantuan polisi bisa diminta jika diperlukan, tetapi setiap saksi diberitahu mengenai keterbatasan praktis perlindungan seperti ini agar mereka dapat memutuskan apakah akan memberikan bukti secara terbuka atau tertulis atau tidak samasekali. Komisi juga memberitahukan kepada para saksi bahwa sesungguhnya CAVR tidak dapat memberikan mereka perlindungan secara fisik di rumah mereka.

Kantor Nasional dan Regional serta masalah kepegawaian

Kantor Nasional

153. Pada awal Komisi ini berdiri, Kantor Nasional di Dili sementara menempati gedung Balai Pelatihan Guru (BPG), bekas kompleks UNAMET yang bersejarah pada 1999 yang kemudian menjadi kantor pusat CNRT pada 2000. Pada masa itu berbagai pembicaraan telah dilakukan dengan Pemerintah Timor-Leste dan para donatur internasional untuk merehabilitasi bekas penjara Comarca di Balide untuk digunakan sebagai rumah bagi Komisi. Mengubah bekas penjara untuk tahanan politik ini menjadi kantor pusat Komisi memiliki makna simbolik yang jelas, serta memiliki fungsi praktis yakni memberi Komisi sebuah basis yang terkemuka dan mudah diakses umum.

Dari penjara menjadi pusat memorial untuk korban, Hak Asasi Manusia, dan Rekonsiliasi

Comarca di Balide, Dili, didirikan pada awal 1960-an oleh pemerintah kolonial Portugis dan kemudian terus digunakan sebagai penjara oleh pihak Indonesia antara Januari 1976 sampai 12 September 1999. Penjara itu rusak ketika terjadi kekerasan di Dili selama September 1999.

Ide untuk merehabilitasi Comarca diusulkan pertama kali oleh Asosiasi Eks-Tahanan Politik (Assepol) pada 2000 dan dijalankan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mendirikan Komisi. Komite Pengarah setuju bahwa jika bekas penjara ini dipelihara sebagai monumen bagi pengingkaran hak-hak asasi manusia dan simbol bagi kemungkinan transformasi, ini akan menjadi sumbangan positif bagi pemulihan. Ide ini menjadi mungkin pada Januari 2002 ketika Xanana Gusmão dalam kunjungannya ke Tokyo memperoleh dana hibah dari Perdana Menteri Jepang sebesar USD 1 juta untuk Komisi. Sekitar setengah dari dana hibah ini akan digunakan untuk pekerjaan infrastruktur, termasuk rehabilitasi Comarca.

Pada Maret 2002, Menteri Kehakiman, Ana Pessoa Pinto, bertemu dengan para Komisaris dan mengonfirmasikan alokasi Comarca untuk Komisi. Suatu Nota Kesepakatan ditandatangani pada April 2002 antara Komisi dan Assepol. Pernjanjian tersebut mengukuhkan bahwa nilai sejarah gedung ini akan dipelihara keasliannya dan Assepol akan dimintai pendapatnya selama rehabilitasi fisik berlangsung. Rencana bagi gedung ini mencakup penggunaannya sebagai kantor nasional Komisi. Gedung ini juga akan digunakan untuk menyimpan arsip berupa dokumen-dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan sejarah pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste, yang dibuat sedemikian rupa agar mudah diakses untuk umum setelah berakhirnya mandat Komisi.

Rancang-bangun rehabilitasi penjara ini dimulai pada Juli 2002. Dokumentasi yang cermat mengenai penggunaan gedung penjara ini dilakukan untuk memelihara apa yang diketahui, termasuk tempat-tempat terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Enampuluh-lima coretan dinding yang dibuat oleh para tahanan Timor, sipir Indonesia, atau anggota milisi, dipelihara sebagaimana aslinya.

Setelah melalui proses tender terbuka, perusahaan yang dipilih untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi dipimpin oleh seorang mantan tahanan Comarca, Julio Alfaro. Rekonstruksi dimulai pada September 2002. Suatu tempat pertemuan tradisional yang besar dibangun di lahan bekas lapangan olahraga, untuk digunakan sebagai tempat audiensi publik nasional dan kegiatan Komisi yang lain. Kebun ditanami oleh Maria José Franco Pereira, seorang anggota polisi Timor-Leste yang melewati beberapa tahun di penjara ini. Ia ditahan bersama ibunya ketika baru berusia empat tahun pada 1976. Acara selamat tradisional, melambungkan pengusiran arwah-arwah yang mengganggu yang berhubungan dengan sejarah penganiayaan yang terjadi di penjara, dilaksanakan pada saat kerja konstruksi selesai.

Kantor pusat nasional CAVR yang baru diresmikan dalam sebuah upacara yang dibuka oleh Presiden Kay Rala Xanana Gusmão, dan dihadiri oleh Uskup Basilio do Nascimento. Presiden Kay Rala Xanana Gusmão memberikan kata sambutan. Acara tersebut dilanjutkan dengan audiensi publik selama dua hari mengenai pemeneraan politik di Timor-Leste. Di antara mereka yang memberi kesaksian adalah bekas tahanan di Comarca ini.

Selama mandat Komisi, Comarca telah menjadi tempat diselenggarakannya audiensi, lokakarya pemulihan, dan berbagai kegiatan lain. Nyanyian, tarian tradisional, teater, doa, dan aktivitas individual dan kelompok mendatangkan semangat pemulihan ke tempat yang pernah menjadi pusat penyiksaan tertutup selama bertahun-tahun. Pastor Domingos (Maubere) Soares, anggota Komite Pengarah yang ikut menyiapkan berdirinya CAVR, berharap bahwa suatu Komisi di Timor-Leste akan menunjukkan kepada rakyat Timor bahwa bunga dapat tumbuh di penjara; harapannya terwujudkan dalam transformasi ini.

154. Direktur Eksekutif yang pertama, Joao de Jesus Baptista, diangkat pada Mei 2002. Setelah pengunduran dirinya pada akhir masa tiga bulan percobaan, Komisi mengangkat Lucio dos Santos untuk menggantikannya.

155. Enam divisi dibentuk untuk melaksanakan dan mendukung program-program yang telah ditetapkan oleh para Komisararis Nasional:

- Pencarian Kebenaran
- Penerimaan (*Acolhimento*) dan Dukungan Korban
- Rekonsiliasi Komunitas
- Koordinasi Regional
- Dukungan Program
- Keuangan dan Administrasi

156. Pada akhir 2003, Komisi membentuk Tim Arsip dan Comarca (lihat sub-bagian di bawah), untuk memelihara arsip-arsip Komisi dan untuk mempersiapkan rencana pengalihan Kantor Nasional menjadi pusat dokumentasi dan pengajaran mengenai hak asasi manusia dan rekonsiliasi.

157. Fokus utama dari tiap divisi adalah untuk mendukung tim-tim distrik. Beberapa divisi juga mengorganisasi kegiatan-kegiatan utama dari Kantor Nasional. Audiensi publik nasional diselenggarakan oleh Divisi Pencarian Kebenaran, dibantu oleh Divisi Dukungan Korban, serta bagian media dan logistik dari Divisi Dukungan Program. Program Reparasi Mendesak dan lokakarya pemulihan diselenggarakan oleh Divisi Penerimaan dan Dukungan Korban dari

Kantor Nasional. Penelitian dan manajemen data juga dilaksanakan oleh Divisi Pencarian Kebenaran dari Kantor Nasional.

158. Pada puncak operasinya, Kantor Nasional memiliki 124 pegawai.

CAVR sebagai institusi pembelajaran

159. Para Komisaris dan staf senior mengakui bahwa Komisi ini telah memulai upaya yang sangat berbeda dari apa pun yang pernah dialami hampir semua anggota staf. Karena itu, menjadi amat penting bahwa strategi pelatihan staf harus bersifat dinamis, menyerap pelajaran selagi program dijalankan. Rancangan awal proses pencarian kebenaran, dukungan korban, dan program rekonsiliasi komunitas di distrik-distrik lebih bersifat teoretis karena tidak pernah diuji di lapangan secara ekstensif sebelumnya. Pengalaman praktis yang didapat tim-tim distrik saat mereka menerapkan program menjadi pelajaran yang berharga dalam menyesuaikan program untuk memenuhi kebutuhan setempat. Peninjauan berkala setiap tiga bulan dilakukan untuk memastikan bahwa pelajaran yang diperoleh staf di lapangan dapat diteruskan kepada pihak manajemen, dan dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap metode operasi. Di sekitar pertengahan periode operasional, dilakukan peninjauan institusional yang menyeluruh. Peninjauan ini menjadi kesempatan resmi bagi semua staf untuk memberi ide dan saran yang berkaitan dengan program-program Komisi.

Pengembangan institusi dan pembangunan kapasitas

160. Pengembangan institusi dan pembangunan kapasitas merupakan bagian besar dari kerja Komisi dalam tahun pertamanya. Selama masa ini, Komisi harus memenuhi jadwal yang sangat ketat dalam hal perekrutan, pengembangan program, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi serta pemecahan masalah. Merancang dan menerapkan kebijakan dan prosedur perekrutan bagi 124 posisi nasional dan 154 posisi tim distrik adalah tantangan besar, terlebih lagi saat Komisi berdiri, semua departemen pemerintah, PBB, dan lembaga internasional lainnya, serta berbagai organisasi non-pemerintah, telah merekrut staf dan telah beroperasi.

161. Pada Juli 2002, Komisi telah merekrut dan melatih 220 pegawai, termasuk para Komisaris Regional dan anggota Tim Distrik. Sekitar 1.900 orang melamar untuk menempati 141 posisi di Kantor-kantor Regional dan Tim Distrik.

162. Karena tidak ada institusi sejenis sebelumnya untuk pekerjaan Komisi, perencanaan dan pelaksanaan pelatihan staf menjadi tantangan utama. Hal ini dilaksanakan dari Juli hingga September 2002. Berangkat dari manfaat pelajaran yang didapat dari proyek percontohan yang dilaksanakan pada Agustus 2002, Komisi memodifikasi program pelatihannya (lihat kotak tulisan tentang proyek percontohan, pada paragraf 72 dalam bab ini). Sama seperti para Komisaris Regional, staf tim distrik juga dilatih dalam dua kelompok besar. Setelah pelatihan

pertama, Staf akan kembali ke distrik mereka selama enam minggu sebelum berakhirnya bagian terakhir dari pelatihan. Hal ini memberi waktu bagi mereka untuk memahami proses perkembangan program Komisi. Tim-tim distrik juga bisa berpikir tentang apa yang telah mereka pelajari selama pelatihan, mencoba semua praktik dan prinsip-prinsip di lapangan, dan menyarankan perubahan pada rencana-rencana operasional.

163. Sebuah tim kecil yang terdiri atas seorang penasihat internasional dan tiga staf Timor-Leste melakukan koordinasi terhadap pengembangan kelembagaan. Tahun pertama adalah masa yang sulit dan penuh tantangan, membutuhkan jam kerja yang panjang, akal panjang, dan keyakinan bahwa Komisi ini dapat berkembang sebagai institusi sehingga akan memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Pendanaan pada awalnya tidak mencukupi karena para donatur bersedia memberi dukungan yang dibutuhkan hanya ketika nilai dari kegiatan Komisi ini menjadi nyata. Dalam keadaan seperti ini, beberapa donatur, khususnya pemerintah Inggris, dengan keyakinan yang mendalam mengambil risiko besar dengan memberi dana awal yang teramat penting.

164. Divisi hak asasi manusia misi UNTAET menyediakan personel untuk jangka waktu pendek untuk membantu memulai Komisi dan membantu dengan banyak cara lain. Divisi ini membantu Komisi mengambil langkah-langkah pertamanya dan berlanjut ke pendirian kantor sementara dan perekrutan personel inti, sampai organisasi ini dapat berjalan di atas kakinya sendiri.

165. Selama masa kerja Komisi ini, tim Pengembangan Institusi dan Pembangunan Kapasitas bekerja dengan Tim Manajemen Senior yang lebih luas untuk mengidentifikasi di mana dukungan internasional jangka pendek dan jangka panjang dibutuhkan, dan untuk merekrut staf yang memenuhi syarat.

Gender dan kepegawaian

166. Komisi ini menjalankan kebijakan yang mendorong praktik kerja yang memaksimalkan kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi sebagai anggota staf organisasi ini dan sebagai peserta dalam program-program Komisi. CAVR mengakui secara resmi bahwa ada kendala-kendala besar yang mencegah perempuan berpartisipasi secara setara di tempat kerja atau dalam aktivitas politik di Timor-Leste, serta kewajiban semua lembaga untuk berupaya memperbaiki situasi ini. Karena itu, di dalam mandat Komisi ini terdapat syarat-syarat khusus bagi keterwakilan gender. Regulasi mensyaratkan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh Komisariss Nasional dan Regional adalah perempuan. Dua dari tujuh Komisariss Nasional dan sepuluh dari 29 Komisariss Regional adalah perempuan. Kebijakan perekrutan staf internal mensyaratkan sekurang-kurangnya 30% dari posisi-posisi yang ada diisi oleh perempuan.

167. Untuk objektivitas program, adalah penting bahwa posisi-posisi tertentu ditempati perempuan dan laki-laki secara setara. Contohnya antara lain staf pengambil pernyataan dan dukungan korban, yang keduanya secara langsung

bekerja dengan para korban dan saksi dalam komunitas. Perekrutan pekerja program perempuan dalam jumlah yang lebih besar dari proporsi normal dalam bidang-bidang ini bertujuan untuk memastikan bahwa secara nasional perempuan mendapat akses yang sama ke semua aspek kerja Komisi. Kebijakan ini dirancang untuk mengakui pengalaman para perempuan selama konflik. Beberapa bagian dari Laporan Akhir, khususnya bab pelanggaran seksual, secara khusus berfokus pada pengalaman para perempuan.

168. Meskipun ada komitmen seperti ini, Komisi tidak berhasil mencapai target perekrutannya bagi perempuan. Hanya dua dari delapan anggota Tim Manajemen Senior adalah perempuan. Hanya satu dari enam Koordinator Regional adalah perempuan dan ketigabelas Koordinator Tim Distrik adalah laki-laki. Norma-norma kultural yang kuat khususnya di pedalaman Timor-Leste menyulitkan pihak Komisi untuk merekrut proporsi perempuan hingga ke tim-tim distrik seperti yang diinginkan. Perlunya anggota staf tinggal jauh dari rumah selama periode tiga bulan untuk melakukan kegiatan lapangan di sub-sub distrik di luar daerah asal mereka sendiri, menimbulkan masalah tersendiri bagi para perempuan yang memiliki tanggung jawab keluarga. Selain itu, terdapat keberatan secara kultural bila seorang perempuan menghabiskan terlalu banyak waktu jauh dari rumah mereka — dan ini semakin menambah persoalan.

Kantor Regional dan Tim Distrik

169. Komisi mendirikan enam Kantor Regional di ibukota Distrik Baucau, Suai, Maliana, Aileu, Dili, dan Oecussi. Kantor-kantor tersebut didirikan kembali di gedung-gedung yang diperbaiki oleh Komisi menggunakan dana dari Pemerintah Jepang, dan diserahkan ke Pemerintah Timor-Leste untuk digunakan setelah Komisi menyelesaikan pekerjaannya. Tiap Kantor Regional mendukung kerja dua Tim Distrik, kecuali Oecussi, yang karena secara geografis terisolasi, menjadi Kantor Regional yang hanya membawahi satu distrik, serta Baucau yang mendukung kerja empat Tim Distrik.

170. Setiap Tim Distrik terdiri atas dua hingga tiga Komisariss Regional, satu Koordinator, empat Pengambil Pernyataan Proses Pencarian Kebenaran (dua perempuan dan dua laki-laki), dua staf Dukungan Korban/Panjangkauan Komunitas (satu perempuan dan satu laki-laki), dan dua staf Rekonsiliasi Komunitas (umumnya satu perempuan dan satu laki-laki),* dengan dukungan seorang Petugas Logistik.

171. Kantor Regional diisi oleh seorang Koordinator Regional, seorang Petugas Keuangan, dan seorang Petugas Logistik. Fungsi utama Kantor-kantor Regional adalah bertindak sebagai penghubung antara Kantor Nasional dan Tim-tim Distrik. Karena sarana komunikasi dan perbankan terbatas atau tidak ada selama puncak kegiatan Komisi ini, Koordinator Regional diberi tanggung jawab untuk memastikan

* Sebelumnya, Tim-tim Distrik hanya memiliki satu pekerja Rekonsiliasi Komunitas, yang bekerja dengan Komisariss Regional dengan fokus pada pekerjaan ini. Pada akhir 2003, pekerja kedua Rekonsiliasi Komunitas ini bergabung dengan masing-masing tim.

adanya komunikasi berkala dengan Kantor Nasional. Kontak antara Tim Distrik dan Kantor Nasional terjadi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Karena kurangnya sarana komunikasi, hal ini biasanya dilakukan dengan cara pihak kantor yang satu bepergian ke kantor yang lain.

172. Pada puncak kerja Komisi, terdapat 278 staf, termasuk Komisaris Regional, yang 154 di antaranya bekerja di dalam tim regional atau tim distrik.

Gender dalam kerja distrik

173. Regulasi UNTAET mensyaratkan bahwa Komisi memasukkan pertimbangan tentang gender ke dalam semua aspek kerja Komisi. Regulasi secara khusus menyatakan bahwa sedikitnya satu dari anggota panel PRK pada tiap audiensi adalah perempuan. Tanpa adanya ketentuan ini, mungkin banyak komunitas tidak akan memilih perempuan untuk duduk di Panel melainkan mengikuti praktik tradisional, yaitu laki-laki sebagai pemimpin setempat yang memimpin acara seperti ini. Hasil yang menarik dari persyaratan gender regulasi tersebut adalah bahwa perempuan yang terpilih untuk berpartisipasi dalam panel sering memainkan peran utama dan biasanya diterima sepenuhnya oleh anggota komunitas dalam kapasitas tersebut.

174. Komisi mengambil inisiatif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan lapangannya. Mengikuti persyaratan kebijakan internal, ada anggota perempuan dalam semua tim pengambilan pernyataan di tingkat distrik. Perempuan juga didorong untuk memberikan pernyataan sehingga turut membantu tercapainya tujuan pencarian kebenaran Komisi. Pada akhir operasi lapangan, hanya 21,4% deponen yang memberikan pernyataan adalah perempuan. Banyak laki-laki yang datang memberikan pernyataan tentang pelanggaran hak asasi manusia atas anggota keluarganya yang perempuan, tetapi banyak perempuan memberi kesaksian tentang apa yang terjadi pada ayah, saudara laki-laki, suami, atau anak laki-laki mereka selama konflik.

175. Tim-tim distrik mengalami kesulitan mengajak perempuan terlibat dalam proses pengambilan pernyataan karena berbagai macam alasan sosial, kultural, dan ekonomi. Di beberapa komunitas, perempuan tidak turut serta dalam penyuluhan komunitas yang diadakan oleh Komisi karena mereka harus tinggal di rumah. Lebih sedikit perempuan daripada laki-laki yang ikut dalam organisasi formal yang memiliki akses informasi tentang kerja Komisi. Beberapa perempuan merasa tidak yakin atau malu untuk maju dan memberikan kesaksian, atau merasa bahwa apa yang mereka alami telah disampaikan oleh anggota laki-laki dari keluarga mereka.

176. Satu tim yang terdiri atas enam perempuan dibentuk untuk melakukan proyek penelitian selama enam bulan tentang pengalaman perempuan selama konflik.* Tim ini mewawancarai lebih daripada 200 deponen, yang kebanyakan adalah

* Tim ini terdiri atas anggota-anggota LSM HAM perempuan seperti Fokupers, ET-Wave, Grupo Feto Foinsa'e Timor-Leste (GFFTL, Asosiasi Perempuan Muda Timor-Leste), dan anggota staf Komisi. Kerja tim ini menerima manfaat besar dari pengetahuan, keterampilan, dan kontak dari organisasi-organisasi tersebut.

perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia. Tim ini juga bertanggung jawab mengidentifikasi dan mendukung para korban yang memberikan kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Perempuan dalam Konflik pada April 2003. Audiensi publik ini sangat penting untuk semakin meningkatkan kesadaran di antara kaum perempuan tentang perlunya berpartisipasi dalam kerja Komisi.

177. Lokakarya pemulihan khusus bagi korban perempuan diadakan untuk memastikan bahwa keadaan khusus mereka mendapat perhatian dan untuk meningkatkan kepercayaan-diri serta membuka diskusi kelompok. Beberapa lokakarya Profil Komunitas melibatkan hanya perempuan. Kegiatan-kegiatan seperti ini difokuskan pada eksplorasi dan pencatatan pengalaman para perempuan dan dampak konflik yang dialami anggota komunitas perempuan.

178. Staf perempuan yang bekerja di tim distrik sering menggunakan cara-cara informal untuk bertemu dengan para perempuan di pelosok, mengunjungi rumah dan tempat-tempat berkumpul, untuk bercakap-cakap, mendengarkan pemikiran para perempuan, dan bersama-sama mencari cara yang akan membantu mereka berpartisipasi dalam kegiatan Komisi. Para anggota perempuan tim distrik sering adalah anggota komunitas terkemuka dan menjadi panutan bagi banyak perempuan di pedesaan.

179. Prinsip kesetaraan gender terkadang bersanding tidak nyaman dengan prinsip-prinsip lain Komisi seperti menghargai dan bekerja dengan tradisi dan pemimpin komunitas, karena model kepemimpinan tradisional dan penyelesaian perselisihan di Timor-Leste cenderung didominasi laki-laki. Para Komisaris regional perempuan, anggota komunitas perempuan yang duduk di panel pada Audiensi Rekonsiliasi Komunitas, dan perempuan anggota staf yang tinggal jauh dari rumah serta bekerja di komunitas pedalaman memberikan tantangan terhadap nilai-nilai tersebut.

180. Pihak Komisi berhati-hati untuk tidak menerapkan strategi-strategi tersebut di komunitas dengan cara yang konfrontatif. Anggota laki-laki seperti juga anggota tim yang perempuan berperan penting dalam diskusi-diskusi dengan para pemimpin tradisional, dan dengan demikian meraih kesuksesan tertentu dalam keseimbangan gender.

181. Komisi ingin secara khusus memuji kerja para anggota perempuan tim distrik, yang menghadapi sejumlah tantangan tambahan tapi berperan penting untuk memastikan bahwa Komisi ini dapat dijangkau oleh perempuan di pedesaan di seluruh Timor-Leste.

Peran staf internasional dalam Komisi

182. Telah diputuskan bahwa semua staf internasional di Komisi, selain Wakil Direktur, akan menjadi penasihat alih-alih manajer bidang tertentu. Para anggota staf internasional bertugas menjalankan pembangunan kapasitas dalam divisi-divisi tempat mereka ditugaskan untuk mendampingi dan memberi masukan bagi rekan kerja Timor mereka sejauh yang dimungkinkan, dan bukannya mengambil alih

tanggung jawab atas pekerjaan itu sendiri. Selain menguasai keahlian teknis dan profesional yang dibutuhkan, staf internasional diharapkan memiliki pemahaman tentang Timor-Leste dan keterampilan bekerja lintas-kultural, termasuk keterampilan berbahasa Tetum atau Indonesia. Para konsultan jangka pendek dipekerjakan jika keahlian khusus dibutuhkan.

Manajemen dan administrasi

Struktur manajemen

183. Manajemen harian badan eksekutif Komisi dipimpin oleh Direktur Eksekutif, Lucio dos Santos, dengan dukungan Wakil Direktur dan Manajer Program, Galuh Wandita. Bersama dengan enam koordinator divisi eksekutif kantor nasional, mereka membentuk Tim Manajemen Senior. Anggota tim tersebut adalah Hugo Maria Fernandes (Pencarian Kebenaran), Jaimito Candido da Costa (Rekonsiliasi Komunitas), Rosario de Araújo (Penerimaan dan Dukungan Korban), José Caetano Guterres (Dukungan Program), Ligia da Costa (Keuangan), dan Francisco João Amaral (Administrasi). Pada April 2003, ketika terjadi restrukturisasi menjadi manajemen yang sepenuhnya dikelola oleh orang Timor, Galuh Wandita berhenti dari posisinya sebagai Wakil Direktur tetapi terus berperan sebagai Manajer Program.

184. Kantor Regional yang kecil berfungsi sebagai jembatan antara Kantor Nasional dan Tim-tim Distrik. Kantor-kantor ini dipimpin oleh Koordinator Regional. Setiap tim distrik dipimpin oleh dua atau tiga Komisariss Regional, yang bertanggung jawab dalam hal manajemen harian atas staf dan program, bersama-sama dengan Koordinator Tim Distrik.

185. Pada Desember 2002, sebuah lokakarya tiga hari, yang diikuti oleh para Komisariss Regional, Koordinator Regional, Koordinator Tim Distrik, manajemen senior, serta Komisariss Nasional, menghasilkan revisi rencana strategis dan klarifikasi tugas-tugas divisi. Pada Mei 2003, Komisi memfasilitasi peninjauan institusi untuk melihat kinerja setiap Tim Distrik, Kantor Regional, dan divisi-divisi Komisi. Peninjauan ini menghasilkan 92 rekomendasi spesifik tentang cara-cara meningkatkan kinerja, koordinasi, penjangkauan, pembagian informasi, dan kesetaraan gender dalam semua aspek kerja Komisi.

Administrasi

186. Divisi Administrasi bertanggung jawab memberi dukungan administratif bagi kerja Komisi. Hal ini termasuk logistik dan pengadaan kebutuhan, sumberdaya manusia, dan dukungan informasi dan teknologi.

187. Koordinator Divisi Administrasi bekerjasama dengan Direktur Eksekutif untuk memastikan semua aspek kerja Komisi memperoleh dukungan. Memenuhi kebutuhan

logistik yang besar dan operasi Komisi yang beragam, dengan dukungan infrastruktur yang minim, adalah tantangan sehari-hari.

Keuangan

188. Divisi Keuangan bertanggung jawab atas pengaturan semua masalah keuangan Komisi. Ini meliputi laporan keuangan bulanan, pengawasan manajemen Kantor Regional, penyediaan semua informasi untuk audit yang dilaksanakan oleh Kantor Inspektur Jenderal pemerintah nasional, dan laporan kepada donatur.

189. Komisi bertanggung jawab menghimpun dananya sendiri. Para Komisar Nasional, staf senior, dan staf penasihat internasional bekerja keras untuk mendapatkan sumberdaya bagi kerja Komisi, dan untuk menjaga pertukaran informasi dan menyediakan laporan kepada para donatur. Menjaga hubungan yang erat dengan para donatur adalah hal inti bagi kesuksesan kerja Komisi. Pendekatan kepada para donatur untuk memberikan dana tambahan pun diperlukan, khususnya karena program-program berkembang menanggapi kehendak komunitas dan Komisi menuntut perpanjangan waktu operasional untuk menyelesaikan Laporan ini. Fakta bahwa para donatur selalu diberi informasi terbaru, bahwa laporan keuangan bersifat menyeluruh dan terkini, dan bahwa informasi yang transparan atas semua aspek operasi Komisi tersedia, menjadi amat penting untuk mendapatkan dana tambahan yang diperlukan.

190. Tiga audit keuangan independen terhadap Komisi ini telah dilakukan oleh Kantor Inspektur Jenderal. Dalam audit-audit tersebut, Inspektur Jenderal memberikan laporan yang positif atas manajemen keuangan Komisi. Beberapa rekomendasi khusus diberikan untuk memperbaiki beberapa bidang administrasi tertentu. Komisi menjalankan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Audit pertama mencakup periode 1 Mei 2002 hingga 31 Desember 2002. Audit kedua mencakup periode 1 Januari 2003 hingga 31 Desember 2003, dan audit ketiga mencakup periode 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2004. Selain Audit yang dilakukan oleh Kantor Inspektur Jenderal RDTL (República Democrática de Timor-Leste), khusus untuk dana bantuan dari Pemerintah Jepang, Komisi juga diaudit oleh auditor internasional, Merit Partners dari Australia, pada 2005, dengan hasil yang memuaskan. Pada saat penulisan Laporan ini, sebuah rencana untuk audit terakhir akan dilaksanakan sesudah ditutupnya Komisi pada 31 Oktober 2005.

Pengurangan staf dan restrukturisasi

191. Dalam penyelesaian kerja lapangan Komisi, pihak eksekutif melakukan proses pengurangan staf dan restrukturisasi. Rencana strategis didasarkan pada periode operasional tiga bulanan di tiap subdistrik. Karena jumlah subdistrik di setiap distrik berbeda-beda, beberapa tim distrik menyelesaikan pekerjaannya sebelum tim distrik yang lain. Hal ini memungkinkan mereka beralih membantu program di daerah di mana masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tim-tim distrik dan kantor-kantor regional menutup kantor mereka ketika semua aktivitas lapangan

selesai pada akhir Maret 2004. Pada saat itu Komisi mengurangi dua per tiga stafnya, dan semua staf yang tersisa dipusatkan di Kantor Nasional.

192. Anggota staf tim distrik yang menyelesaikan tugas mereka pada Maret 2004 dialihkan ke Comarca untuk membantu memasukkan ke dalam *database* sejumlah besar informasi yang telah dikumpulkan. Pengurangan staf berikutnya dilakukan ketika proses pemasukan data selesai pada Juli 2004.

193. Ciri kerja Komisi berubah drastis dengan berakhirnya operasi lapangan. Struktur manajemen yang baru diperlukan karena kini aktivitas berfokus pada penulisan dan produksi Laporan Akhir, serta persiapan pengarsipan. Setelah dua bulan masa transisi, Kantor Nasional direorganisasi. Struktur yang baru terdiri atas enam divisi: Laporan Akhir (Editorial, Penulisan, dan Produksi, termasuk penerjemahan); Reparasi; Rekomendasi dan Kampanye; Comarca dan Arsip; Administrasi; dan Keuangan. Sejalan dengan berkembangnya proses penulisan, penyuntingan, penerjemahan, dan produksi Laporan Akhir, tim lain tidak lagi dibutuhkan atau hanya memerlukan jauh lebih sedikit staf. Proses pengurangan personel bertahap berlanjut hingga akhir periode mandat Komisi.

Membangun hubungan untuk masa depan

Hubungan langsung

194. Fokus utama kerja Komisi ini adalah pada tingkat akar-rumput, dengan komunitas-komunitas di penjurur Timor-Leste, khususnya dengan para korban pelanggaran hak asasi manusia dan keluarga mereka. Adalah hal yang penting bahwa pemuka masyarakat, dan berbagai institusi serta organisasi memahami Komisi dan pekerjaannya. Komisi ini berkoordinasi dengan kepala desa dan pemimpin tradisional lainnya, organisasi perempuan dan pemuda, para pastor, suster, dan pemuka Gereja Katolik serta organisasi keagamaan lainnya, polisi, pegawai negeri lokal, dan perwakilan masyarakat sipil lainnya. Di beberapa komunitas, telah dibentuk kelompok-kelompok dukungan korban, contohnya kelompok Rate Laek di Liquiçá. Mereka adalah mitra penting bagi Komisi.

195. Lembaga pemerintah nasional termasuk Kepresidenan, Parlemen, dan Kabinet selalu diberi informasi terkini tentang kerja Komisi. Para wakil Komisi menghadap sidang pleno Parlemen Nasional dan komite-komite terkait ketika tiga permohonan perpanjangan mandat Komisi ini dibahas. Pada kesempatan tersebut, para anggota Parlemen meminta untuk diberitahu mengenai perkembangan terkini dari kerja Komisi. Dalam kedua kesempatan tersebut, pandangan umum Parlemen adalah bahwa tugas Komisi ini demikian penting bagi Timor-Leste sehingga harus diberi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.

196. Presiden Xanana Gusmão telah mendukung kerja Komisi dalam berbagai cara praktis, termasuk meminta dana bagi Komisi dari para donatur, hadir pada peresmian kantor pusat Komisi Comarca, mendukung audiensi publik nasional

yang sensitif tentang konflik politik internal tahun 1974 - 1976. Perdana Menteri Mari Alkatiri dan Kabinetnya, khususnya Menteri Senior dan Urusan Luar Negeri dan Kerjasama, José Ramos-Horta, juga telah sangat mendukung Komisi ini. Komisi ini memperoleh dukungan lintas-partai di Parlemen. Menteri urusan Administrasi Negara, Ana Pessoa Pinto adalah anggota Dewan Penasihat Komisi, seperti halnya Jose Ramos-Horta.

197. Gereja Katolik memegang peranan yang terhormat dan berpengaruh dalam keseharian sebagian besar orang Timor, yang lebih daripada 90%-nya menganut ajaran Katolik. Gereja telah memberi dukungan moral yang besar bagi kerja Komisi. Para pastor secara individual mendorong umat mereka untuk membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan Komisi. Para pemuka Katolik sering dipilih untuk menjadi anggota Panel audiensi PRK. Gereja Protestan juga telah mendukung program-program Komisi. Salah satu dari Komisariss Nasional, Pendeta Agostinho de Vasconcelos adalah pendeta Protestan, sedangkan Wakil Ketua, Padre Jovito do Régio de Araújo adalah pastor Katolik.

198. Komisi ini juga berkoordinasi dengan berbagai LSM nasional yang bekerja di bidang keadilan dan hak asasi manusia. Banyak Komisariss Nasional dan Regional memiliki latar belakang sebagai aktivis hak asasi manusia dan anggota organisasi hak asasi manusia. Keberadaan Komisi ini jelas-jelas telah berdampak pada organisasi hak asasi manusia lainnya. Terdapat semacam kebimbangan di antara organisasi-organisasi ini mengenai kemunculan tiba-tiba sebuah ajang hak asasi manusia yang relatif besar ini, yang mendapat dukungan resmi dan mampu menarik dana yang cukup besar. Hal ini dapat dimengerti khususnya bagi LSM-LSM yang telah beroperasi pada masa pendudukan Indonesia yang jauh lebih sulit, ketika para anggota mereka menghadapi risiko pribadi yang besar akibat komitmen tersebut, dan yang akan terus bekerja di bidang rekonsiliasi dan hak asasi manusia setelah Komisi ini dibubarkan.

199. Secara khusus, dua LSM hak asasi manusia, yakni Asosiasaun Hak (Yayasan HAK) dan Fokupers telah bekerja dengan Komisi dalam berbagai cara, termasuk dalam penelitian, dukungan bagi korban pelanggaran, dan dalam dokumentasi kerja Komisi pada audiensi tematis. Justice System Monitoring Program (JSMP) dan LSM Laò Hamutuk mengulas secara kritis beberapa aspek kerja Komisi.

200. Pihak Komisi mencari ide dari berbagai sektor untuk menyusun rekomendasi dalam Laporan ini. Komisi mengadakan enam lokakarya pemangku kepentingan [*stakeholder*] pada tingkat nasional, untuk meminta pendapat dari individu dan organisasi terkemuka yang aktif dalam bidang-bidang yang relevan dengan mandat Komisi. Topik-topik tersebut mencakup rekonsiliasi, kesehatan, pendidikan, keamanan, anak-anak, dan keadilan. Komisi juga bekerja erat dengan Komite Penyelenggara Kongres Nasional Perempuan Kedua pada Juli 2004. CAVR berharap untuk mempertimbangkan ide-ide dan keprihatinan para wakil perempuan dari seluruh penjurur negeri dalam perumusan Rekomendasinya.

Nota Kesepahaman dengan Kantor Kejaksaan Agung

Pada 4 Juni 2002 ketua Komisi, Aniceto Guterres Lopes, dan Jaksa Agung Timor-Leste, Longuinhos Monteiro, menandatangani Nota Kesepahaman tentang hubungan kerja antara Komisi dan Kejaksaan Agung Timor-Leste, yang tanggungjawabnya mencakup penuntutan atas kejahatan berat. Pentingnya ada nota seperti ini sangat terlihat pada tahap operasional dari kerja pencarian kebenaran dan rekonsiliasi komunitas Komisi.

Nota ini memerinci kondisi di mana informasi dapat dipertukarkan antara Komisi dan Kejaksaan Agung. Ia mencantumkan bahwa Komisi dan Kantor Jaksa akan melindungi independensi dan integritas kedua institusi ini. Ia juga akan melindungi kerahasiaan informasi yang diterima oleh kedua institusi. Sementara Komisi dan Kejaksaan Agung adalah dua institusi independen yang memiliki mandat yang berbeda, nota ini mengakui bahwa “kedua organisasi diwajibkan bekerja bersama sejauh yang dimungkinkan di dalam lingkup mandat masing-masing untuk membantu proses keadilan bagi pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste di masa lalu.”

Kampanye media dan informasi

201. Strategi media massa Komisi ini berpusat pada produksi program radio mingguan, *Dalan ba Dame* (Jalan Menuju Damai). Radio adalah media yang paling luas jangkauannya dan paling efektif di Timor-Leste. Jaringan radio menyediakan cakupan nasional yang hampir menyeluruh, dan beberapa stasiun berbasis komunitas di distrik-distrik menggunakan bahasa setempat dalam siarannya. Siaran radio juga dipancarkan ke banyak orang asal Timor-Leste yang tinggal di tempat-tempat pengungsian dan komunitas di Timor Barat. Siaran televisi terbatas hanya di Dili, dan (lebih terbatas lagi) di kota besar kedua, Baucau. Mayoritas penduduk perdesaan tidak dapat membaca dan menulis, sehingga membatasi efektivitas materi tertulis.

202. Dengan memproduksi program radionya sendiri, Komisi ini memastikan bahwa komunitas-komunitas di seluruh wilayah dapat merasakan dimensi nasional atas apa yang terjadi di daerah mereka. Pemirsa nasional dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan di akar-rumput. Program radio mingguan berdurasi satu jam ini disiarkan oleh stasiun radio nasional Radio Timor-Leste dan stasiun

radio nasional Gereja Katolik Radio Timor Kmanek. Program pertama disiarkan pada 4 Desember 2002 dan disiarkan terus-menerus setiap minggu selama masa kerja Komisi. Pada Oktober 2004 durasi program tersebut dikurangi menjadi 30 menit. Stasiun radio komunitas di beberapa distrik juga menyiarkan program ini. Komisi ini juga bekerja dengan stasiun-stasiun radio yang lebih kecil seperti Radio Falintil dan Radio Rakambia untuk menyiarkan audiensi rekonsiliasi komunitas secara langsung ke beberapa distrik. *Dalan ba Dame* diproduksi dalam bahasa Tetum, meskipun peliputan audiensi lokal atau peristiwa-peristiwa lainnya sering menggunakan bahasa-bahasa regional. Kemudian, stasiun-stasiun radio komunitas sering membahas kerja Komisi dalam bahasa-bahasa setempat mereka.

203. Komisi ini membangun kerjasama dengan siaran televisi nasional Televisi Timor-Leste (TVTL). Televisi Timor-Leste dan Radio Timor-Leste menghadirkan liputan lengkap tujuh audiensi nasional. Komisi juga membuat dua video tentang kerja Komisi untuk disebarluaskan ke komunitas-komunitas. Tim-tim distrik membawa televisi dan generator ke komunitas pedalaman untuk memperlihatkan video-video tersebut, yang terbukti sangat efektif untuk mengumpulkan orang-orang dan berbagi informasi. Video-video tersebut juga diperlihatkan kepada mereka yang berada di Timor Barat sebagai bagian dari program penjangkauan. Video-video ini diproduksi dalam bahasa Tetum sebagai bahasa narasi, dengan alih-suara berbahasa Indonesia dan Inggris.

204. Sejumlah terbitan cetak diproduksi untuk menjelaskan mandat dan kerja Komisi kepada komunitas-komunitas. Terbitan-terbitan ini diproduksi dalam bahasa Tetum, Indonesia, dan Inggris. Sebuah buletin yang melaporkan perkembangan kerja Komisi dalam bahasa Portugis, Indonesia, dan Inggris, diterbitkan setiap dua bulan. Sasaran utama mereka adalah para pemangku kepentingan institusi dan organisasi.

205. Unit ini juga menangani siaran media dan pers. Artikel-artikel dan materi-materi tertulis dipublikasikan di *Cidadaun* dan *Talitakum*, jurnal Timor-Leste ternama dengan jangkauan pembaca di Timor-Leste dan Timor Barat. Benda-benda populer yang digunakan untuk memperkenalkan Komisi ini antara lain poster, buklet, brosur, dan kaus.

Komunitas internasional

206. Komisi ini menyadari bahwa kerja Komisi ini penting baik secara nasional maupun internasional. Karena itu, Komisi mendorong terbentuknya hubungan dengan komunitas hak asasi manusia internasional. Ini barangkali menjadi perhatian utama di kawasan Timor-Leste itu sendiri, berhubung tidak satu pun negara di kawasan ini pernah mendirikan komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

207. Sejalan dengan perkembangan kegiatannya, Komisi ini menerima begitu banyak permintaan informasi tentang kerjanya, khususnya program PRK yang inovatif. Para Komisararis Nasional dan staf senior menghadiri berbagai konferensi internasional, seminar, dan lokakarya tentang hak asasi manusia, rekonsiliasi

pascakonflik, dan keadilan transisi, untuk berbagi pengalaman serta belajar dari pengalaman peserta lain. Selain itu Komisi juga menerima puluhan delegasi internasional yang berkunjung untuk belajar dari pengalaman Komisi. Tamu-tamu ini mencakup pejabat senior dan perwakilan-perwakilan dari negara-negara yang mengalami konflik atau berupaya untuk mengatasi masalah-masalah mereka dari masa lalu, seperti Myanmar, Afghanistan, Bougainville, Fiji, Filipina/Mindanao, Indonesia/Aceh dan Papua Barat, dan Sri Lanka.

208. PBB memberikan dukungan yang signifikan bagi Komisi ini. Unit Hak Asasi Manusia UNTAET dan UNMISSET, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dan UNDP, baik yang berada di Timor-Leste maupun di New York, memberikan dukungan dan saran teknis. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Mary Robinson, bertemu dengan para Komisaris Nasional di Dili pada April 2002 dan menghadiri audiensi rekonsiliasi komunitas di Distrik Liquiçá. Mary Robinson menjadi anggota Dewan Penasihat Komisi.

209. Komisaris Tinggi PBB bagi Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Migrasi Internasional (International Organization for Migration, IOM) bekerja membantu para pengungsi yang kembali dari Timor Barat serta menolong kebutuhan logistik Komisi, seperti menyediakan penerbangan ke distrik kantong Oecussi. Komisi ini juga bekerja erat dengan beberapa LSM internasional yang memiliki kantor di Timor-Leste. Sejumlah LSM memberikan submisi, atau menyediakan hasil penelitian independen mengenai aspek kerja Komisi. LSM-LSM tersebut antara lain Catholic Relief Services dan The Asia Foundation.

210. Pusat Keadilan Transisi Internasional (ICTJ) di New York memberikan saran dan dukungan bagi Komisi ini sejak Komisi ini berdiri hingga menyelesaikan tugasnya; ICTJ adalah mitra yang sangat berharga (lihat boks Tonggak-tonggak Sejarah Komisi, di akhir bagian ini). Kelompok Analisis Data Hak Asasi Manusia (The Human Rights Data Analysis Group - HRDAG) memberikan dukungan teknis. Mereka membentuk dan memelihara *database* hak asasi manusia. Mereka juga melakukan penelitian angka kematian dan menganalisis data yang dikumpulkan. Bagian 6: Profil pelanggaran HAM, dan Lampiran Metodologi Statistik, mencantumkan penjelasan lengkap tentang kerja HRDAG.

211. Komisi ini merancang situs web yang memberi jangkauan kepada komunitas internasional. Dokumen-dokumen yang dipublikasi, buletin berkala tentang kerja Komisi, dan foto-foto peristiwa juga ditempatkan di situs web ini. Situs web ini sering dikunjungi oleh anggota-anggota media internasional, organisasi hak asasi manusia, pelajar, akademisi, dan lembaga donatur. Laporan ini juga diterbitkan di situs web tersebut (<http://www.cavr-timorleste.org>).

Penjangkauan komunitas dan informasi publik

212. Unit Informasi Publik dan Penjangkauan Komunitas bertujuan meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan dan kalangan umum mengenai Komisi dan kerjanya, dengan membangun hubungan langsung, pendidikan publik,

dan kampanye media. Hal ini meliputi pembangunan mekanisme penyediaan informasi bagi semua tingkatan masyarakat, dari pengambil keputusan nasional dan lembaga serta organisasi non-pemerintah, administrasi distrik, dan para pemimpin dan kelompok komunitas lokal, serta khalayak umum yang lebih luas. Ini juga menjangkau kalangan internasional, termasuk lembaga-lembaga di dalam dan di luar Timor-Leste, negara dan organisasi donatur, dan komunitas hak asasi manusia dan peradilan internasional.

Tabel 1: Tonggak-tonggak sejarah Komisi

| |
|---|
| <p>Juni 2000 Lokakarya tentang keadilan transisi bagi para pelaku kampanye hak asasi manusia.</p> |
| <p>Agustus 2000 Kongres CNRT menyerukan didirikannya sebuah komisi untuk kebenaran dan rekonsiliasi bagi Timor-Leste. Sebuah Komite Pengarah untuk pendirian Komisi tersebut dibentuk.</p> |
| <p>Desember 2000 Konsultasi skala nasional diadakan. Para anggota Komite Pengarah merancang regulasi.</p> |
| <p>Desember 2000 Pengesahan kebijakan oleh Kabinet Administrasi Transisi.</p> |
| <p>April 2001 Kabinet Administrasi Transisi mengesahkan rancangan regulasi.</p> |
| <p>13 Juni 2001 Dewan Nasional mengesahkan rancangan regulasi</p> |
| <p>13 Juli 2001 Penetapan Regulasi UNTAET 2001/10 oleh Administrator Transisi; pendirian Kantor Sementara</p> |

23 - 25 Agustus 2001

Konsultasi dengan para pemimpin pro-otonomi oleh Komite Pengarah, dengan dukungan Kantor Sementara, di Kupang dan Bali.

15 - 16 September 2001

Pertemuan konsultasi kedua dengan para pemimpin pro-otonomi di Bali.

20 September 2001

Panel Seleksi didirikan untuk memilih para Komisaris Nasional dan mengumpulkan nominasi-nominasi untuk Komisaris Regional.

Oktober 2001

Kunjungan oleh Panel Seleksi ke 13 distrik dan ke Timor Barat untuk menominasikan para Komisaris Nasional dan Regional.

21 Januari 2002

Para Komisaris Nasional diambil sumpah jabatannya.

22 - 26 Januari 2002

Para Komisaris Nasional melakukan Retret di Maubara; prinsip-prinsip inti dari Komisi dikembangkan, dengan bantuan ICTJ.

4 Februari 2002

Pertemuan para Komisaris Nasional pertama. Pemilihan Ketua dan Deputi Ketua Komisi, serta penentuan portofolio.

7 Februari 2002

Penunjukan para Komisaris Nasional diterbitkan dalam edaran resmi pemerintah, dan secara resmi memulai proses pendirian Komisi selama dua bulan.

April-Mei 2002

Perekrutan para staf senior eksekutif; Komisi diakui dalam Konstitusi baru Timor-Leste.

15 Mei 2002

Duapuluh-sembilan Komisaris Regional diambil sumpah jabatannya oleh Administrator Transisi.

Juni - Juli 2002

Dokumen-dokumen kebijakan, termasuk Rencana Strategis, Petunjuk Operasi, dan Petunjuk Finansial dikembangkan; kebijakan tentang kerahasiaan, anak-anak, perempuan, dan hak-hak para deponen; perangkat-perangkat dasar seperti formulir pengambilan pernyataan untuk pencarian fakta dan rekonsiliasi komunitas mulai dikembangkan.

4 Juni 2002

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Jaksa Agung

Juni - Agustus 2002

Perekrutan dan pelatihan para staf nasional, distrik, dan regional; program Komisi dimulai di 13 distrik, termasuk konsultasi-konsultasi subdistrik; didirikan 6 divisi di Kantor Nasional; didirikan 6 kantor Regional yang mengawasi hasil kerja dari 13 Tim Distrik.

23 Agustus 2002

Audiensi Rekonsiliasi Komunitas pertama di Desa Maumeta, Liquiçá.

September 2002

Tinjauan dan perencanaan program di Dare; Program Reparasi Mendesak dilaksanakan; pengambilan pernyataan dimulai.

11- 12 November 2002

Audiensi Publik Tingkat Nasional pertama, audiensi korban yang diberi tema "Dengarkanlah Suara Kami"

Desember 2002

Evaluasi dari periode operasional tiga bulan pertama.

Januari 2003

Revisi rencana strategis dan mekanisme koordinasi.

17-18 Februari 2003

Comarca Balide diresmikan sebagai kantor pusat nasional Komisi; Audiensi Publik Kedua tentang Penyiksaan dan Penahanan; program penjangkauan Timor Barat dimulai.

21 April 2003

Audiensi Korban Subdistrik pertama, di Ainaro Vila, Ainaro.

28 - 29 April 2003

Audiensi Publik Nasional ketiga tentang Perempuan dan Konflik.

Juni 2003

Evaluasi institusi terhadap Komisi dan kemajuannya; Sensus Makam dimulai.

23 - 27 Juni 2003

Lokakarya Pemulihan pertama.

28 - 29 Juli 2003

Audiensi Publik Nasional keempat tentang Kelaparan dan Pemindahan Paksa.

9 - 14 Agustus 2003

Lokakarya Pemulihan kedua.

September 2003

Survei Tingkat Kematian Retrospektif dimulai.

19 - 21 November 2003

Audiensi Publik Nasional kelima tentang Pembantaian.

2 - 6 Desember 2003

Lokakarya Pemulihan ketiga.

15 - 18 Desember 2003

Audiensi Publik Nasional keenam tentang Konflik Partai Internal.

Desember 2003

Lokakarya evaluasi dan menentukan prioritas untuk kerja lapangan yang tersisa.

27 - 30 Januari 2004

Lokakarya Pemulihan Keempat (bagi perempuan).

9 - 13 Februari 2004

Lokakarya Pemulihan kelima.

9 - 11 Maret 2004

Lokakarya Pemulihan keenam.

15 - 18 Maret 2004

Audiensi Publik Nasional ketujuh tentang Aktor Internasional dan Hak Penentuan Nasib Sendiri.

Maret 2004

Penutupan kegiatan di distrik; pertemuan penutupan kegiatan distrik dan lomba gambar anak-anak di 13 distrik; lokakarya evaluasi nasional; restrukturisasi dan penyusutan badan eksekutif.

29 - 30 Maret 2004

Audiensi Publik Nasional kedelapan tentang Anak-anak dan Konflik; pameran lomba gambar anak-anak di Kantor Nasional.

April 2004

Didirikannya Tim Penulisan dan Editorial.

Oktober 2004

Parlemen menyetujui memperpanjang mandat komisi menjadi 39 bulan kegiatan, untuk menyampaikan Laporan Akhirnya dan ditutup pada 7 Juli 2005.

Juli 2005

Parlemen Nasional memperpanjang mandat Komisi ke 29 Juli dan meminta Presiden untuk menyerahkan Laporan Akhir ke Parlemen Nasional dalam Bahasa Portugis dua bulan kemudian.

29 Juli

Parlemen Nasional memperpanjang mandat Komisi hingga 31 Oktober

31 Oktober

Penyerahan Laporan Akhir ke Presiden RDTL dan Penutupan Komisi

Catatan akhir

1. Regulasi 10/2001 Pasal 13.1(a)(iv).
2. Hasil Kongres Nasional CNRT, 21 – 30 Agustus 2000, hal. 16.
3. Regulasi nomor 10/2001, Bagian 11.1.
4. Regulasi UNTAET nomor 10/2001, sub-bagian 39 dan 44.

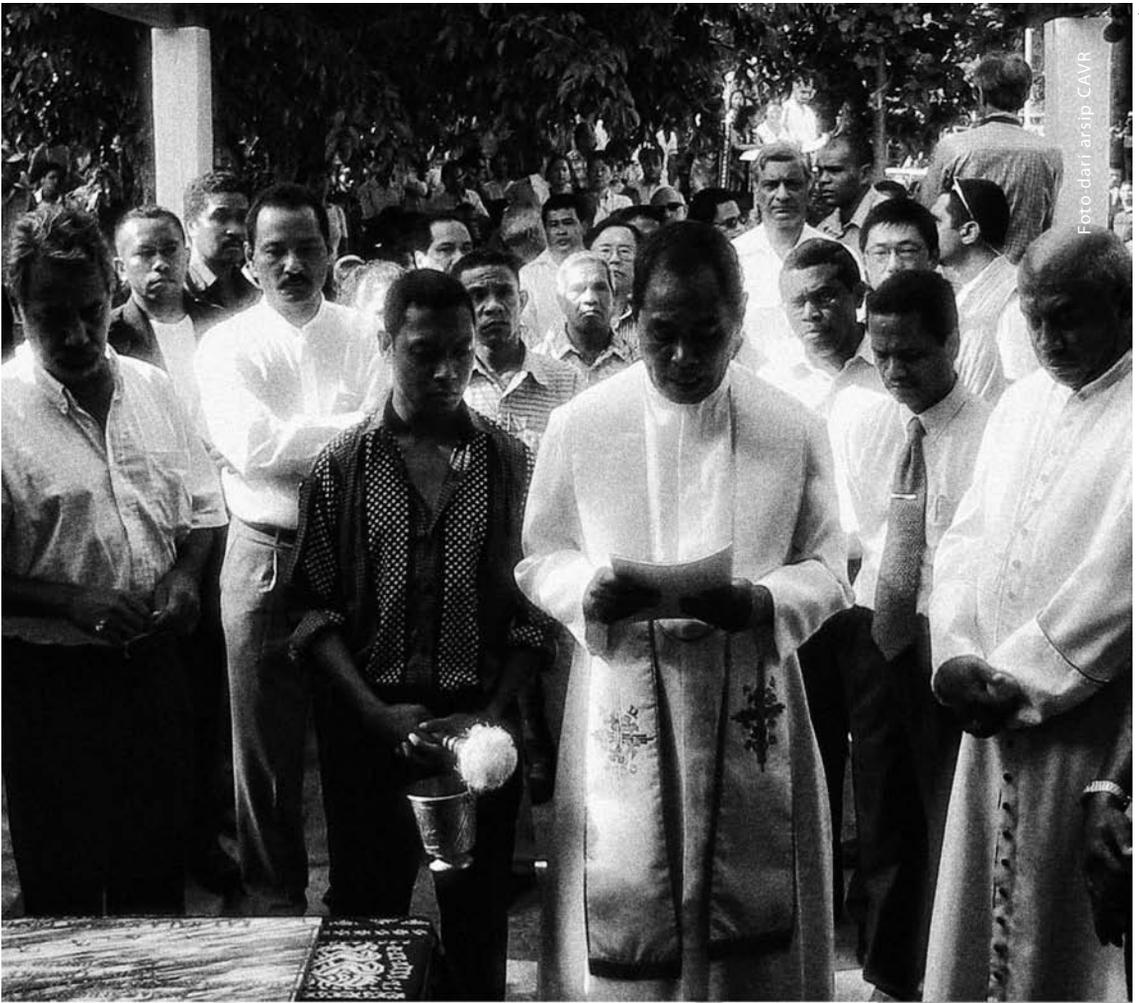


Foto dari arsip CAVR

Chega!

Bagian

2.

Mandat Komisi

Bagian 2. Mandat Komisi

79 | Pendahuluan

- 80 | Batasan waktu
- 81 | Persoalan-persoalan dengan relevansi khusus
- 81 | Makna 'berkaitan dengan konflik politik'
- 81 | Pelanggaran Hak Asasi Manusia
- 82 | Definisi Komisi tentang 'Pelanggaran Hak Asasi Manusia'
- 83 | Prioritas yang diberikan kepada kategori pelanggaran tertentu
- 84 | Wewenang yang berkaitan dengan penyelidikan
- 85 | Tanggung jawab hukum Komisararis dan staf
- 85 | Informasi rahasia yang diberikan kepada Komisi
- 86 | Pemakaian nama-nama tertentu dalam Laporan
- 90 | Berbagai standar yang digunakan untuk menentukan persoalan tanggung jawab dan pertanggungjawaban
- 91 | Invasi Indonesia atas Timor-Leste
- 91 | Keadilan Perang dan Keadilan dalam Perang
- 93 | Prosedur Rekonsiliasi Komunitas
- 94 | Pendekatan Komisi yang berbasis komunitas

95 | Lampiran: Prinsip-prinsip hukum yang relevan

- 95 | Pendahuluan: Hukum internasional yang relevan
 - 96 | Berbagai standar hak asasi manusia internasional
 - 97 | **Hak atas penentuan nasib sendiri**
 - 99 | **Pembunuhan di luar hukum**
 - 100 | **Penghilangan**
 - 101 | **Pemindahan, pemukiman kembali, dan kelaparan**
 - 102 | **Penahanan sewenang-wenang**
 - 103 | **Kondisi pemenjaraan**
 - 104 | **Penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat**
 - 107 | **Pengadilan yang tidak adil**
 - 108 | **Hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan berkumpul**
 - 109 | **Pemeriksaan dan bentuk lain penyerangan/ pelecehan seksual**
 - 110 | **Perbudakan seksual**
 - 110 | **Hak anak**
 - 112 | **Hak sosial dan ekonomi**

| | | |
|-----|--|---|
| 113 | | Hak reproduktif |
| 113 | | Hak asasi manusia dalam keadaan darurat nasional |
| 114 | | Hukum Kemanusiaan Internasional |
| 114 | | Pendahuluan |
| 114 | | Keberadaan suatu konflik bersenjata |
| 115 | | Status konflik di Timor-Leste: konflik bersenjata internasional atau internal? |
| 117 | | Perjanjian yang relevan |
| 118 | | Kewajiban perjanjian Indonesia |
| 118 | | Kewajiban perjanjian Portugal |
| 120 | | Kewajiban negara dan kelompok bersenjata |
| 120 | | <i>Konflik bersenjata internasional: Invasi dan pendudukan Indonesia</i> |
| 120 | | <i>Serangan terhadap penduduk dan objek sipil dilarang</i> |
| 123 | | <i>Perlakuan buruk terhadap petempur musuh</i> |
| 124 | | <i>Cara perang yang tidak sah</i> |
| 124 | | <i>Perekrutan paksa ke dalam kegiatan militer</i> |
| 124 | | <i>Kewajiban penguasa pendudukan</i> |
| 126 | | Boks: Apakah Timor-Leste merupakan wilayah pendudukan? |
| 127 | | Konflik bersenjata internal: Perang Saudara Agustus - September 1975 |
| 128 | | Kewajiban individu (tanggung jawab pidana perorangan) |
| 128 | | <i>Genosida</i> |
| 128 | | <i>Kejahatan terhadap kemanusiaan</i> |
| 129 | | <i>Agresi</i> |
| 129 | | <i>Kejahatan perang</i> |
| 131 | | Tanggung jawab komando |
| 131 | | 'Tindak Pidana': Hukum domestik Portugal dan Indonesia |
| 131 | | Pendahuluan |
| 132 | | Boks: Hukum mana yang berlaku di Timor-Leste? |
| 133 | | Hukum Portugal |
| 133 | | Hukum Indonesia |
| 135 | | Hukum militer Indonesia |

Mandat Komisi



Pendahuluan

1. Regulasi UNTAET 10/2001 mendirikan CAVR sebagai otoritas independen, dengan ketentuan bahwa badan ini “tidak ada di bawah kekuasaan atau perintah” menteri kabinet atau pejabat pemerintah lainnya.^{*} Pendirian Komisi ini belakangan mendapat pengakuan dalam Konstitusi RDTL, pasal 162. Komisi diberi masa kerja awal 24 bulan. Tiga amandemen berikutnya oleh Parlemen Nasional atas Regulasi ini memperpanjang masa kerja Komisi, pertama-tama hingga 30 bulan, kemudian hingga 39 bulan, dan akhirnya perpanjangan sampai 31 Oktober 2005, atau 42 bulan lebih sedikit.[†]
2. Menurut mandatnya, tugas-tugas Komisi mencakup hal-hal berikut ini:
 1. Menyelidiki dan menetapkan kebenaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks konflik politik di Timor-Leste dari 25 April 1974 sampai 25 Oktober 1999.¹ Penyelidikan tersebut meliputi:
 - konteks, sebab, anteseden, motif, dan perspektif yang mendorong timbulnya pelanggaran;²
 - apakah pelanggaran tersebut merupakan bagian dari pola pelanggaran yang sistematis;³
 - identitas orang, otoritas, institusi, dan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran;⁴

^{*} Regulasi 10/2001 tentang Pendirian Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor-Leste Pasal 2.2. Dalam Bagian ini, Komisi menggunakan istilah Timor-Leste jika secara khusus merujuk kepada Regulasi 10/2001 dan instrumen hukum lainnya seperti Resolusi PBB dan hukum internasional; Komisi juga secara umum menggunakan istilah Timor-Leste sebagai istilah yang digunakan selama periode mandat dalam konteks hukum internasional dan persoalan Penentuan Nasib Sendiri.

[†] Meski Pasal 2.4 Regulasi mengizinkan perpanjangan selama enam bulan tanpa pertimbangan parlemen, kedua perpanjangan disahkan oleh amandemen resmi terhadap Regulasi. Undang-Undang Parlemen Republik Demokrasi Timor-Leste No. 7/2003, Pasal 1 memperpanjang mandat sampai 30 bulan. Undang-Undang Parlemen Republik Demokrasi Timor-Leste No. 13/2004, Artikel 1, memperpanjang mandat sampai 7 Juli 2005. Undang-Undang Parlemen Republik Demokrasi Timor-Leste No. 11/2005, Artikel 1, memperpanjang mandat sampai 31 Oktober 2005.

- apakah pelanggaran tersebut merupakan hasil dari perencanaan, kebijakan, atau otorisasi negara, kelompok politik, kelompok militer, gerakan kemerdekaan, atau kelompok atau individu lainnya;⁵
 - peranan faktor-faktor internal maupun eksternal;⁶ dan
 - pertanggungjawaban, “secara politis atau yang lain” atas pelanggaran.⁷
2. Menyiapkan “laporan lengkap yang menggambarkan kegiatan dan putusan, berdasarkan informasi yang faktual dan objektif dan bukti yang dikumpulkan atau diterima atau diberikan pada Komisi”⁸
 3. Merumuskan rekomendasi tentang perubahan dan inisiatif yang dirancang untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia,⁹ dan untuk menanggapi kebutuhan para korban. Rekomendasi tersebut bisa mencakup usulan mengenai langkah-langkah hukum, administratif dan lainnya yang dapat membantu tercapainya tujuan Komisi;¹⁰
 4. Merekomendasikan penuntutan, apabila perlu, kepada Kejaksaan Agung;¹¹
 5. Mendorong rekonsiliasi;¹²
 6. Melaksanakan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK) yang bertujuan mendukung penerimaan dan reintegrasi individu yang telah merugikan komunitas mereka dengan melakukan pelanggaran pidana ringan dan tindakan merugikan lainnya;¹³
 7. Membantu memulihkan martabat para korban;¹⁴
 8. Memajukan hak asasi manusia.¹⁵
3. Komisi diberi wewenang khusus berkaitan dengan fungsi-fungsi Pencarian Kebenaran dan Rekonsiliasi Komunitas, yang tertuang secara terperinci di dalam Regulasi. Selain itu, Komisi juga diberi wewenang yang luas untuk menjalankan aktivitas apa pun yang sesuai dengan mandatnya.¹⁶ Dengan demikian Komisi diberi wewenang untuk menerapkan berbagai program yang dirancang untuk mendorong rekonsiliasi, memulihkan martabat para korban dan memajukan hak asasi manusia.

Batasan waktu

4. Mandat Komisi ini, yang berkaitan dengan pencarian kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan juga “tindakan merugikan” yang dapat ditangani PRK, mencakup periode selama dua puluh lima setengah tahun, antara 24 April 1974 dan 25 Oktober 1999. Kedua tanggal tersebut menandai awal dan akhir periode konflik politik paling gencar di Timor-Leste. Jatuhnya rezim Marcello Caetano di Portugal pada April 1974 memberikan kesempatan kepada berbagai wilayah jajahan Portugis, termasuk Timor-Leste, untuk menggunakan hak mereka dalam menentukan nasib sendiri. Di Timor-Leste, terbukanya kesempatan politik segera menimbulkan pertarungan memperebutkan kekuasaan politik di antara berbagai partai politik utama dan disusul dengan terjadinya invasi dan pendudukan Indonesia. Setelah merebaknya kekerasan menyusul Jajak Pendapat 30 Agustus 1999,

saat mayoritas orang Timor-Leste memilih opsi merdeka, pada 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 1272 yang mengesahkan berdirinya UNTAET sebagai pemerintahan transisi dengan wewenang untuk menjalankan kekuasaan administratif pemerintahan sepenuhnya atas wilayah Timor-Leste, sejalan dengan persiapan kemerdekaan negara ini.*

Persoalan-persoalan dengan relevansi khusus

5. Regulasi mewajibkan Komisi untuk “memberikan perhatian khusus” kepada tiga aspek utama konflik politik selama menjalankan fungsi pencarian kebenaran:

1. Kejadian-kejadian sebelum, selama, dan sesudah Jajak Pendapat 30 Agustus 1999;
2. Kejadian dan pengalaman semua pihak menjelang, selama, dan setelah masuknya Indonesia ke Timor-Leste pada 7 Desember 1975; dan
3. Dampak dari berbagai kebijakan dan praktik Indonesia dan angkatan bersenjata yang berada di Timor-Leste antara 7 Desember 1975 sampai 25 Oktober 1999.¹⁷

Makna ‘berkaitan dengan konflik politik’

6. Menurut Regulasi, “konflik politik di Timor-Leste” berarti perjuangan bersenjata dan tidak bersenjata dan perselisihan berkaitan dengan kedaulatan dan status politik Timor-Leste, dengan pengaturan atau pemerintahan Timor-Leste, dengan invasi dan pendudukan Indonesia secara tidak sah atas Timor-Leste, atau berbagai kombinasi hal di atas.¹⁸

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

7. Hukum nasional dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara mematuhi segala kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada mereka. Namun, tugas untuk memajukan dan menghargai hak asasi manusia didasarkan pada kesepakatan dan kewajiban internasional dan karena itu hanya berlaku bagi negara-negara berdaulat. Karena itu, individu bisa saja melakukan kejahatan yang melanggar hukum nasional dan, dalam beberapa kasus, hukum internasional, tapi pandangan tradisional tentang hak asasi manusia ialah bahwa pelanggaran-pelanggaran ini hanya dapat dilakukan oleh negara dan aparatnya.¹⁹

8. Definisi tradisional tersebut menimbulkan kesulitan dalam perancangan mandat yang sesuai bagi kerja komisi-komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Konteks pelanggaran besar-besaran, yang menjadi sasaran penelitian atau penyelidikan komisi, sering melibatkan tidak hanya aparat negara, seperti anggota militer dan

* Resolusi Dewan Keamanan 1272 (1999) mengesahkan berdirinya UNTAET pada 25 Oktober 1999, dan memberi mandat untuk “menjalankan wewenang legislatif dan eksekutif sepenuhnya, termasuk penegakan hukum”.

polisi serta pejabat pemerintah, tetapi juga anggota kelompok oposisi, partai politik, milisi, perusahaan, dan individu lain. Penjelasan apa pun tentang “kebenaran” yang berkaitan dengan suatu konflik tidak akan lengkap bila tidak mencakup tindakan semua pihak tersebut di atas.

9. Satu contoh upaya mengatasi masalah tersebut adalah upaya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan yang menafsirkan undang-undang yang memberi mereka kewenangan mencakup “perkembangan modern dalam hukum hak asasi manusia internasional,”²⁰ yang mengakui adanya kesamaan kapasitas antara aktor negara atau bukan negara untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

10. Regulasi yang mengesahkan pembentukan Komisi mengandung definisi istilah ‘pelanggaran hak asasi manusia’ yang lebih luas daripada biasanya, yang meliputi pelanggaran berbagai standar hak asasi manusia, hukum kemanusiaan internasional, dan ‘tindakan kriminal’ yang melanggar hukum internasional atau hukum nasional. Definisi ini meliputi pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara.

Definisi Komisi tentang ‘Pelanggaran Hak Asasi Manusia’

11. Menurut Pasal 1(c) Regulasi, ‘pelanggaran hak asasi manusia’ berarti:
 - a. Pelanggaran standar-standar internasional hak asasi manusia;
 - b. Pelanggaran hukum kemanusiaan internasional; dan
 - c. Tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan dalam konteks konflik politik di Timor-Leste antara 25 April 1974 sampai dengan 25 Oktober 1999.²¹
12. Pemakaian istilah ‘pelanggaran *standar* hak asasi manusia’ alih-alih ‘pelanggaran *hukum* hak asasi manusia’, dan dimasukkannya dua kategori luas dari berbagai hukum yang tidak terbatas pada pelanggaran oleh pelaku negara, jelas menunjukkan bahwa mandat Komisi tidak dimaksudkan untuk dibatasi pada pemeriksaan perilaku pelaku negara saja.
13. Karena itu, Komisi menafsirkan mandatnya mencakup tindakan apa pun yang dilakukan dalam konteks konflik politik, baik oleh perorangan, anggota kelompok, institusi, maupun oleh negara, yang melanggar sekurang-kurangnya satu standar hak asasi manusia internasional, ketentuan hukum kemanusiaan internasional, atau kejahatan yang melanggar hukum nasional atau internasional.
14. Dengan demikian, mandat ini mencakup pemeriksaan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wakil dan aparat pemerintah Indonesia (termasuk anggota pasukan keamanannya, Hansip atau kelompok pertahanan sipil lainnya, dan kelompok-kelompok milisi), pemerintah Portugal dan aparatnya, anggota Fretilin, Falintil, dan kelompok prokemerdekaan lainnya, dan anggota UDT, Apodeti, Kota, Tralabhistha, dan partai-partai politik lainnya, anggota negara-negara berdaulat yang lain, institusi, kelompok, serta individu-individu yang memainkan peran dalam konteks konflik politik.

15. Menurut definisi Regulasi:

- Komisi harus menyelidiki pelanggaran berbagai macam ‘standar hak asasi manusia’. Hal ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hak-hak dan kebebasan fundamental yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (dan protokol-protokolnya); Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat; dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak.²²
- Komisi harus menyelidiki pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, yang mengatur perilaku dalam situasi konflik bersenjata. Menurut Regulasi, berbagai standar yang harus dipertimbangkan dalam hal ini meliputi berbagai konvensi internasional utama yang relevan, termasuk Konvensi Jenewa, serta ‘hukum dan kebiasaan perang’.²²
- Komisi harus menyelidiki pelanggaran hukum pidana Portugis atau Indonesia dan hukum pidana internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida.

Prioritas yang diberikan kepada kategori pelanggaran tertentu

16. Tentu saja mustahil bagi Komisi untuk menyelidiki dan melaporkan semua pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama periode mandat. Komisi telah memilih untuk menyelidiki pelanggaran hak-hak fundamental paling berat yang sesuai dengan mandat Komisi. Secara ringkas, kategori standar-standar hak asasi manusia yang menjadi pusat perhatian Komisi adalah sebagai berikut:

1. Hak atas penentuan nasib sendiri
2. Hak atas hidup (pembunuhan tidak sah dan penghilangannya)
3. Berbagai hak yang berkaitan dengan pemindahan, pemukiman kembali, dan kelaparan (hak atas makanan yang cukup, bebas dari kelaparan, hak atas air dan tempat tinggal yang layak, kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal)
4. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang dan hak atas kondisi penahanan yang layak
5. Hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat

.....
* Pasal 1 (e) Regulasi menyatakan bahwa ‘standar internasional hak asasi manusia’ berarti standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional seperti tertuang dalam Pasal 2 Regulasi UNTAET No. 1999/1. Pasal yang relevan pada Regulasi UNTAET 1999/1 merujuk kepada instrumen internasional hak asasi manusia ini.

6. Hak atas peradilan yang adil
 7. Hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat
 8. Hak-hak yang dilanggar oleh tindak perkosaan atau bentuk lain penyerangan atau pelecehan seksual (khususnya larangan atas penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat)
 9. Hak-hak yang dilanggar oleh praktik perbudakan seksual (termasuk larangan penyiksaan, hak untuk menikah dengan persetujuan penuh dan bebas, dan larangan perbudakan)
 10. Hak-hak anak (serangkaian hak termasuk hak atas 'perawatan khusus')
 11. Hak-hak sosial dan ekonomi
 12. Hak reproduksi (hak untuk berkeluarga dan kebebasan memutuskan jumlah anak serta jarak kelahiran anak-anak)
17. Dalam memutuskan apakah tindakan tertentu merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan apakah individu atau institusi bertanggung jawab atas dan/atau dapat mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut, Komisi menggunakan definisi-definisi tentang pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan, yang diambil dari hukum internasional. Lampiran A (Prinsip-prinsip hukum yang relevan) di akhir bagian ini menjelaskan secara terperinci berbagai definisi ini.
18. Lampiran tersebut mencakup definisi standar hak asasi manusia yang diperinci di atas dan ringkasan singkat berbagai ketentuan hukum kemanusiaan internasional, hukum pidana internasional, hukum Portugis, dan hukum Indonesia yang relevan.

Wewenang yang berkaitan dengan penyelidikan

19. Regulasi ini memberi Komisi wewenang luas untuk melakukan penyelidikan. Hal ini meliputi wewenang untuk:
- memerintahkan individu menghadiri audiensi dan menjawab pertanyaan,
 - memerintahkan penyerahan berbagai dokumen atau objek spesifik yang relevan dengan penyelidikan,
 - meminta Jaksa Penyidik dari Pengadilan Distrik untuk mengeluarkan surat perintah pengeledahan yang mengizinkan polisi mengeledah lokasi tertentu,
 - meminta informasi dari otoritas pemerintah, baik yang berada di dalam maupun di luar Timor-Leste,
 - mengumpulkan informasi dan mengadakan pertemuan di negara lain, dan
 - mengadakan audiensi publik dan audiensi tertutup serta melindungi identitas saksi-saksi tertentu dalam audiensi tersebut.²³
20. Regulasi ini menyatakan suatu pelanggaran pidana bila seseorang secara sengaja memberi informasi yang tidak benar kepada Komisi, tidak memenuhi perintah Komisi tanpa dalih yang beralasan, menghalangi Komisi dalam menjalankan

aktivitasnya, berusaha memengaruhi Komisi secara tidak wajar, mengancam atau mengintimidasi saksi, dan membuka informasi rahasia.²⁴

Tanggung jawab hukum Komisariss dan staf

21. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang biasanya berlaku bagi komisi-komisi serupa, orang-orang yang bekerja atas nama Komisi, termasuk para Komisariss, mendapatkan kekebalan terhadap tuntutan hukum “berkaitan dengan temuan, pandangan, atau rekomendasi apa pun yang dibuat dengan niat baik selama masa kerja Komisi atau yang tecermin dalam laporan akhir Komisi.”²⁵

Informasi rahasia yang diberikan kepada Komisi

22. Informasi dapat diberikan secara rahasia bila dirasa perlu.²⁶ Komisi tidak dapat dipaksa untuk memberikan informasi kepada badan atau individu mana pun, termasuk aparat pemerintah, dengan satu-satunya pengecualian apabila ada permintaan khusus dari Kejaksaan Agung.²⁷

23. “Hak Kejaksaan Agung untuk mengakses semua informasi yang diberikan kepada Komisi” berarti tidak ada jaminan yang dapat diberikan kepada calon saksi bahwa bukti dan pengakuan mereka tidak akan digunakan melawan mereka dalam proses hukum di masa yang akan datang.

24. Ketentuan ini mungkin telah menghalangi Komisi untuk memperoleh beberapa informasi penting yang bisa mendukung fungsi pencarian kebenarannya. Namun, Komisi juga menyadari bahwa Komisi ini didirikan sebagai institusi yang kerjanya, dalam beberapa hal, melengkapi proses Peradilan Kejahatan Berat. Ketentuan-ketentuan Regulasi mencerminkan keputusan kebijakan bahwa kerja Kejaksaan tidak boleh terganggu oleh fungsi pencarian kebenaran Komisi. Kebijakan ini didasarkan pada pengakuan atas pentingnya usaha membangun mekanisme yang kukuh dan jelas untuk mencapai keadilan dan meningkatkan rasa hormat kepada supremasi hukum, dalam konteks negara baru yang rapuh, dengan sejarah yang penuh ketidakadilan. Walaupun ada keterbatasan tersebut, Komisi yakin bahwa wewenang besar yang diberikan kepada Komisi cukup bagi Komisi untuk menyusun Laporan yang memuat penjelasan yang kuat, objektif, dan komprehensif tentang pelanggaran yang terjadi selama periode konflik.

25. Dalam upaya mencapai tujuannya, Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki “orang-orang, otoritas, institusi, dan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia”, apakah pelanggaran tersebut merupakan bagian dari pola pelanggaran yang sistematis, persoalan akuntabilitas yang muncul dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan untuk menyiapkan sebuah “laporan komprehensif yang menjelaskan aktivitas dan temuan Komisi, berdasarkan informasi yang faktual dan objektif dan bukti yang dikumpulkan atau diterima, atau yang tersedia bagi Komisi.”²⁸

26. Konsekuensi dari ketentuan-ketentuan tersebut memberi tugas bagi Komisi untuk mengumumkan temuannya sehubungan dengan identitas orang-orang,

otoritas, dan institusi yang pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, bila ada informasi faktual dan objektif yang mendukung temuan tersebut.

27. Komisi memakai standar ‘perdata’ tentang “perimbangan segala probabilitas untuk menentukan apakah bukti yang ada cukup memadai untuk memutuskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia sudah terjadi, dan apakah individu atau institusi tertentu bertanggung jawab dan memikul tanggung jawab. Standar ini, yang juga telah digunakan oleh sejumlah komisi serupa lainnya, mengharuskan adanya penilaian bahwa probabilitasnya lebih besar bahwa tuduhan-tuduhan yang sedang dipertimbangkan benar adanya.

Pemakaian nama-nama tertentu dalam Laporan

28. CAVR dirancang sebagai bagian dari program yang lebih besar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan dalam hubungannya dengan tindak kejahatan di masa lalu, dan rekonsiliasi di Timor-Leste. CAVR dibentuk sebagai mekanisme yang melengkapi proses Peradilan ‘Kejahatan Berat’ yang didukung PBB. Sebelum Komisi dibentuk, Unit Penyidikan Kejahatan Berat dan Panel Khusus di Pengadilan Distrik Dili sudah dibentuk, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272,^{*} dengan mandat menyidik dan mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan berat yang dilakukan antara 1 Januari 1999 dan 25 Oktober 1999.[†] Dengan adanya prinsip yurisdiksi universal (tidak dibatasi waktu dan tempat) Unit Penyidikan Kejahatan Berat juga diberi wewenang untuk menyidik dan mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan melawan kemanusiaan, atas kejahatan perang dan genosida, sepanjang periode mandat Komisi dari April 1974 sampai Oktober 1999.[‡]

29. Karena itu, Komisi didirikan dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan ‘komisi-komisi kebenaran dan rekonsiliasi’ lainnya, yang mandatnya mengakui pentingnya mempersiapkan sepuh-penuhnya kasus-kasus individu, untuk dipakai di pengadilan dalam situasi saat tidak ada keinginan dan kemampuan untuk mengadili orang-orang yang paling bertanggung jawab. Ini bukan masalah utama di Timor-Leste saat Komisi didirikan, karena penyidikan dan pengadilan bagi mereka yang paling bertanggung jawab, yang masih berada di Timor-Leste, jelas merupakan tanggung jawab suatu bagian misi UNTAET, yang diberi pendanaan cukup banyak dan mempekerjakan penyidik dan hakim internasional. Komisi Penyidikan PBB mengenai pelanggaran yang dilakukan di Timor-Leste juga memberikan rekomendasi pembentukan pengadilan internasional,²⁹ dan agar pemerintah Indonesia membentuk pengadilan *ad hoc*

* Resolusi Dewan Keamanan 1272 (1999) mengesahkan berdirinya UNTAET pada 25 Oktober 1999, yang memberi mandat untuk “melaksanakan wewenang legislatif dan eksekutif, termasuk penegakan keadilan”.

† Regulasi UNTAET 2000/16 menyatakan bahwa panel hakim yang menangani kasus-kasus ‘Kejahatan Berat’ dan di Pengadilan Banding, terdiri atas dua hakim internasional dan satu hakim Timor.

‡ Yurisdiksi universal secara jelas dituangkan dalam Regulasi UNTAET 2000/15 Pasal 2.

di Jakarta untuk mengadili mereka yang paling bertanggung jawab yang berada dalam wilayah hukumnya.

30. Untuk menghindari duplikasi proses Unit Penyidikan Kejahatan Berat, mandat Komisi memberi tugas kepada Komisi untuk melihat pola lebih luas dari pelanggaran yang terjadi selama periode duapuluh lima setengah tahun yang relevan.

31. Mandat ini secara khusus mencakup tugas untuk melaporkan konteks, latar belakang, dan faktor sejarah yang mendorong terjadinya pelanggaran, dan apakah pelanggaran ini dilakukan sebagai bagian dari pola pelanggaran yang sistematis.³⁰

32. Periode yang relevan mencakup konflik politik yang signifikan yang melibatkan faksi-faksi di Timor-Leste, invasi militer skala penuh, pelanggaran skala besar selama hampir 25 tahun pendudukan militer, dan merebaknya kekerasan dan penghancuran yang tidak terkendali pada 1999. Tidak mungkin bagi Komisi untuk memenuhi mandat untuk melaporkan pola-pola pelanggaran sepanjang periode ini, dan menentukan apakah pelanggaran ini merupakan bagian dari program pelanggaran yang sistematis, bila Komisi juga berupaya melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai insiden-insiden utama dalam jumlah terbatas, dengan menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu-individu tertentu secara hukum. Mandat ini mengakui pentingnya mencari dan melaporkan pola-pola yang jelas terlihat dalam ribuan kasus pelanggaran berat, memberikan penjelasan bagaimana dan mengapa pelanggaran ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, dan apa yang bisa dilakukan agar pelanggaran ini tidak terulang.³¹

33. Sesuai alasan di atas, perhatian utama kerja penyelidikan Komisi adalah untuk menetapkan negara dan institusi mana yang terlibat dalam pola pelanggaran sistematis. Komisi menitikberatkan pada tujuan memahami, dan melaporkan keseluruhan apa yang terjadi, sejauh hal ini bisa dicapai dalam batas waktu dan sumberdaya kerja Komisi.

34. Pernyataan dan wawancara yang diberikan kepada Komisi mencakup nama-nama ribuan orang yang diidentifikasi sebagai pelaku pelanggaran. Dalam memutuskan untuk memasukkan nama-nama ini dalam Laporan Akhir, Komisi membicarakan secara panjang lebar, selama beberapa bulan, faktor-faktor yang bertentangan yang terlibat dalam keputusan ini. Meski banyak dilakukan diskusi yang rumit, diskusi-diskusi ini menitikberatkan pada sejumlah persoalan utama, termasuk sebagai berikut:

- Baru ada keadilan dalam tingkat yang terbatas bila dibandingkan dengan pelanggaran massal yang terjadi di Timor-Leste. Mempermalukan orang di depan publik dapat memberikan kontribusi kepada pencapaian keadilan ini. Individu yang telah melakukan kejahatan berat harus disebut namanya, demi memerangi kekebalan hukum. Ini terutama penting jika pelaku bisa melakukan pelanggaran lebih lanjut terhadap korban-korban di masa mendatang.
- Komisi tidak memiliki wewenang untuk melakukan apa pun terhadap kebebasan individu seperti halnya pengadilan kriminal, atau wewenang

untuk memberi kompensasi yang memengaruhi aset individu seperti halnya pengadilan sipil. Namun, penyebutan nama seorang pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia secara terbuka berpotensi menghancurkan reputasi, karier, dan kehidupan keluarga mereka. Ini juga memiliki dampak serius dalam kehidupan pasangan dan anak-anak dari orang-orang yang namanya disebut. Karena itu, penyebutan nama harus dilandasi bukti yang kuat dan tepercaya yang menutup peluang adanya kesalahan.

- Hak fundamental semua orang yang menghadapi tuduhan berat ialah diberi peluang menjawab tuduhan tersebut. Peluang ini akan memenuhi syarat keadilan dan memastikan bahwa penjelasan tertuduh dalam kaitan dengan tuduhan dipertimbangkan sebelum keputusan mengenai tanggung jawab hukumnya dicapai. Misalnya, tertuduh mungkin bisa menjelaskan bahwa dia tidak berada di wilayah yang sama saat pelanggaran terjadi, atau bahwa orang yang menuduh mempunyai motivasi pribadi.
- Konteks kerja Komisi meliputi tantangan menyelidiki ribuan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara tetangga, Indonesia, khususnya anggota pasukan militer negara tersebut. Perlunya menemukan dan menghubungi perwira militer Indonesia untuk memberi mereka kesempatan menjawab tuduhan, terutama tuduhan yang berkaitan dengan kejadian yang berlangsung 25 tahun yang lalu, merupakan tantangan logistik besar bagi Komisi.
- Menghubungi pelaku yang menjadi tertuduh yang berada di wilayah Timor-Leste juga sangat rumit. Timor-Leste tidak mempunyai sistem pos yang berfungsi sampai ke seluruh pelosok negeri dan juga tidak ada jalur telepon darat. Angkutan ke berbagai wilayah juga tidak dimungkinkan pada musim hujan dan sulit dilakukan pada musim kering. Semua dokumen umum dihancurkan selama kekerasan pada 1999. Karena itu, tidak ada dokumen yang bisa membantu mengidentifikasi tempat pelaku mungkin tinggal, atau pernah tinggal, pada saat pelanggaran terjadi.
- Di Timor-Leste ada banyak sekali nama yang sama. Jadi, misalnya, ada ribuan orang yang mempunyai nama yang sama seperti João, Tomás, José, dan nama keluarga, seperti Guterres dan Alves. Karena itu, kemungkinan salah-identifikasi terhadap pelaku hanya berdasarkan nama sangatlah besar. Kemungkinan ini semakin besar karena di dalam banyak kasus pelaku hanya dikenal dan diidentifikasi lewat nama pertama (misalnya, João, Tomás, atau Jacinto).
- Fakta bahwa korban biasanya tidak mengetahui secara pribadi nama-nama perwira militer Indonesia yang melakukan pelanggaran, tetapi lebih sering mengenal nama-nama orang Timor-Leste yang terlibat, menyebabkan lebih banyak orang Timor-Leste yang disebut namanya, meski saksi melaporkan lebih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia. Saksi sering bisa mengidentifikasi tingkat komando para pelaku, batalion, atau unit mereka tetapi tidak tahu nama-nama pelaku.
- Fakta yang tidak menguntungkan ialah bahwa pada masa transisi pemerintahan yang rapuh, yang saat ini dijalani Timor-Leste, tidaklah realistis

untuk berharap bahwa keselamatan para saksi yang mengidentifikasi pelaku bisa dijamin. Pada kenyataannya, Komisi pernah mengalami peristiwa saat korban yang menyebut nama pelaku dalam audiensi publik di tingkat subdistrik mendapat ancaman dan serangan kejam dari pelaku yang disebut namanya dan keluarganya, yang mengakibatkan terlukanya suami korban dan pemindahan paksa dari rumah mereka. Peluang adanya masalah berat yang ditimbulkan karena penyebutan nama pelaku tidak bisa diabaikan dalam konteks Timor-Leste.

- Mandat Komisi khususnya mencakup wewenang untuk memberikan nama-nama kepada Kejaksaan Agung Timor-Leste, dengan rekomendasi untuk diajukan ke pengadilan bila dirasa perlu.³²

35. Dalam menentukan nama-nama yang dimasukkan dalam Laporan, Komisi mencari keseimbangan antara berbagai faktor yang bertentangan tersebut. Keputusan didasarkan atas keyakinan kuat akan perlunya penyebutan nama pelaku yang paling bertanggung jawab, dan diimbangi dengan syarat fundamental bahwa Komisi, sebagai organisasi yang diberi mandat untuk memberikan rekomendasi cara-cara untuk menjamin tidak terulangnya pelanggaran hak asasi manusia, tidak boleh terlibat dalam pelanggaran hak-hak fundamental individu dengan cara apa pun.

36. Pada Bagian 8 laporan ini, “Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban”, Komisi menyediakan perincian-perincian berikut ini:

1. Temuan-temuan dalam kaitannya dengan tanggung jawab dan pertanggungjawaban institusi-institusi utama yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia sepanjang masih dalam batas-batas mandat pasukan keamanan Indonesia, dan partai politik Fretilin, UDT, dan Apodeti, serta Negara-negara yang menurut temuan Komisi melakukan pelanggaran berat atas kewajiban mereka untuk mengakui dan membantu rakyat Timor-Leste untuk menentukan realitas politik, sosial, dan ekonomi mereka sendiri.
2. Nama-nama mereka yang dianggap Komisi paling bertanggung jawab atas pola pelanggaran yang paling berat yang terjadi selama periode mandat. Orang-orang ini adalah komandan senior pasukan keamanan Indonesia dan pejabat senior pemerintahan Indonesia selama periode pelanggaran massal.
3. Analisa mengenai tanggung jawab berbagai ‘institusi mikro’ yang paling sering disebut terkait dengan pelaku pelanggaran hak-hak asasi manusia. Ini termasuk kantor pejabat pemerintah yang paling sering disebut sebagai pelaku, terutama batalion dan kelompok binaan pasukan keamanan Indonesia. Daftar orang-orang yang memiliki jabatan senior di ‘lembaga-lembaga mikro’ ini, selama periode yang relevan, akan diberikan setelah ringkasan singkat mengenai pola pelanggaran.
4. Sebuah daftar berisi semua orang yang didakwa melakukan Tindak Kejahatan Melawan Kemanusiaan oleh Kejaksaan Agung Timor-Leste dalam kaitannya dengan kekerasan massal sepanjang 1999. Daftar ini juga menyebutkan apakah terdakwa sudah diadili dan dihukum oleh Panel Khusus. Daftar ini juga

mencantumkan nama-nama tertuduh yang tinggal di luar wilayah Timor-Leste, di wilayah hukum pemerintah Indonesia. Komisi berharap daftar ini akan membantu memecahkan masalah kurangnya informasi mengenai proses hukum, yang merupakan keluhan umum dari masyarakat selama operasi lapangan Komisi.

37. Komisi juga sudah mengumpulkan daftar nama pelaku yang telah diidentifikasi oleh saksi dan korban sebagai terlibat dalam berbagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Karena Komisi tidak mempunyai cukup waktu dan sumberdaya untuk menyelesaikan penyelidikan secara mendalam tentang setiap kasus pelanggaran ini, atau memberi tahu setiap orang yang terlibat, Komisi tidak memasukkan daftar ini di Laporan. Namun, Komisi, sesuai wewenangnya yang tertuang dalam Pasal 3(1)(e) Regulasi 10/2001,^{*} memberikan seluruh daftar kepada Kejaksaan Agung Timor-Leste, dengan rekomendasi bahwa setiap orang yang disebut namanya harus diselidiki lebih lanjut dan jika perlu diadili. Daftar ini juga sudah dikirim ke Kantor Presiden Republik Timor-Leste dengan rekomendasi bahwa semua orang yang disebut namanya harus dilarang menduduki jabatan pemerintahan.

38. Ribuan nama pelaku yang diidentifikasi oleh korban dan saksi dan diberikan kepada Komisi telah diganti dalam teks Laporan dengan kode yang tidak ada hubungannya dengan nama pelaku yang diidentifikasi.

39. Keputusan Komisi untuk memberikan daftar kepada Kejaksaan Agung dan Presiden dan mengganti nama-nama di teks, didasarkan pada adanya sistem yang relatif efektif dan pendanaan yang baik untuk mengadili orang-orang di Timor-Leste, kemuskilan usaha menghubungi orang-orang yang diidentifikasi agar bisa diberi kesempatan hak menjawab, sangat seringnya persamaan nama di Timor-Leste, dan kemungkinan hal ini menyebabkan kesalahan identifikasi individu, ketidakmampuan Komisi menjamin keselamatan korban yang mengidentifikasi pelaku; serta akibat skala penyelidikan dan mandatnya yang panjang, Komisi tidak bisa melakukan penyelidikan atas setiap kasus secara mendalam. Lebih jauh lagi, hal ini dilakukan untuk melindungi korban, dengan tidak memasukkan nama-nama korban pelanggaran seksual yang dilaporkan ke Komisi.

Berbagai standar yang digunakan untuk menentukan persoalan tanggung jawab dan pertanggungjawaban

40. Meskipun jelas bahwa Komisi bukan pengadilan dan tidak memiliki kompetensi untuk membuat temuan hukum, Komisi ini diwajibkan membuat temuan mengenai tanggung jawab dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia. Untuk memenuhi tugas-tugas tersebut, Komisi menyadari bahwa ada banyak tingkat pertanggungjawaban yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini termasuk tanggung jawab politis, sejarah, moral, dan hukum.

^{*} Regulasi 10/2001 Pasal 3.1 "Tujuan Komisi harus mencakup: ... (e) merujuk *pelanggaran hak asasi manusia* kepada Kejaksaan Agung untuk mengadili kasus pelanggaran bila dirasa perlu."

41. Dalam kaitannya dengan kewajibannya untuk membuat temuan tentang persoalan pertanggungjawaban, Komisi sejauh mungkin telah menilai tindakan individu, negara, dan institusi terhadap aturan-aturan hukum domestik dan internasional yang berlaku dan mengikat pada saat tindakan tersebut dilakukan.

Invasi Indonesia atas Timor-Leste

42. Seperti yang telah disebutkan, mandat Komisi memberikan kepadanya suatu tugas khusus untuk mengkaji peristiwa dan pengalaman semua pihak pada saat pasukan keamanan Indonesia masuk ke Timor-Leste pada 7 Desember 1975. Masalah penggunaan kekerasan untuk memasuki wilayah negara lain diatur oleh kewajiban dan tugas negara anggota PBB dan berbagai aturan dasar hukum internasional.

43. Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1950.¹ Portugal menjadi negara anggota pada 14 Desember 1955. Semua negara anggota PBB terikat oleh Piagam PBB dan berbagai kewajiban berikut:

1. Mereka harus mematuhi keputusan Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan Piagam PBB semua negara anggota setuju untuk menerima dan menjalankan keputusan Dewan Keamanan.³³ Dalam dua kesempatan, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang menyerukan Indonesia untuk menarik pasukannya dari wilayah Timor-Leste.³⁴
2. Mereka tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap negara lain mana pun. Larangan penggunaan kekerasan merupakan aturan fundamental dalam Piagam PBB.³⁵ Aturan ini juga merupakan salah satu aturan terpenting dalam hukum kebiasaan internasional.³⁶ Kekerasan hanya dapat digunakan untuk membela diri atau bila disetujui oleh Dewan Keamanan.³⁷ Menggunakan kekerasan untuk mencampuri perang saudara yang terjadi di wilayah negara lain juga dilarang, bahkan bila hal ini dinyatakan dilakukan atas permintaan salah satu dari kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik tersebut.³⁸

44. Piagam PBB juga memberi kewajiban kepada negara-negara yang mengelola wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri.³⁹ Menurut sistem PBB, Portugal adalah negara yang bertanggung jawab atas administrasi wilayah Timor-Leste. Negara pengelola mempunyai kewajiban untuk memajukan kesejahteraan penduduk di wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri yang mereka kelola, termasuk dengan menjamin perlakuan adil dan perlindungan bagi penduduk dari penganiayaan.⁴⁰

Keadilan Perang dan Keadilan dalam Perang

45. Mandat Komisi terentang sepanjang beberapa periode konflik politik yang berbeda-beda. Mandat ini mencakup kekerasan berskala kecil, yang kemudian

.....
* Indonesia mengaku mengundurkan diri dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965 tetapi bergabung kembali pada September 1966.

berujung pada konflik berskala penuh, yang dikenal sebagai “perang saudara” antara faksi-faksi di Timor-Leste, yang tak lama kemudian disusul oleh invasi dan pendudukan Indonesia atas wilayah ini, resistansi terhadap pendudukan tersebut, dan penghancuran dan kekerasan besar-besaran seputar Jajak Pendapat pada 1999. Lampiran pada akhir bab ini memaparkan secara terperinci berbagai prinsip hukum, khususnya prinsip-prinsip yang diambil dari hukum kemanusiaan internasional, yang digunakan Komisi dalam mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sepanjang periode tersebut.

46. Materi yang didapat Komisi mencakup klaim yang dibuat berbagai pihak dalam konflik bahwa mereka benar dalam memutuskan untuk melancarkan perang. Argumen ini bersandar pada keyakinan yang keliru bahwa bila suatu pihak memiliki alasan untuk melancarkan perang, pihak tersebut boleh menggunakan cara apa pun untuk bertempur dalam perang tersebut.

47. Argumen yang terkait, yang tidak didukung oleh hukum internasional, ialah bahwa karena invasi dan pendudukan tidaklah sah, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan aparatnya setelah itu juga tidak sah dan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pada saat melawan situasi tidak sah ini dapat dibenarkan.

48. Prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional telah memandu Komisi dalam mengkaji berbagai persoalan ini.* Berdasarkan kodifikasi hukum ini, mereka yang bertempur dalam ‘perang adil’ pun hanya boleh menggunakan cara-cara yang benar untuk meraih tujuan mereka. Aturan yang sama tentang tata cara perang berlaku sama bagi semua pihak. Petempur yang memutuskan untuk mengangkat senjata untuk berperang menjadi sasaran sah dalam perang tersebut. Semua pihak yang tidak bertempur, termasuk penduduk sipil dan tawanan perang, berhak untuk dilindungi. Meskipun petempur dari semua pihak, misalnya, dapat secara sah dibunuh dalam pertempuran, mereka tidak boleh dibunuh apabila sudah tidak lagi berperan aktif dalam konflik tersebut, dan tidak pernah boleh disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi.†

49. Meskipun suatu angkatan bersenjata yang besar, bersenjata lengkap, dan profesional, yang secara tidak sah bertempur untuk memperluas batas teritorial mereka tidak bisa dianggap memiliki derajat legitimasi moral yang sama dengan orang-orang yang mengangkat senjata untuk mempertahankan rumah dan keluarga mereka dari penyerang, namun berbagai aturan yang mengatur perilaku selama perang berlaku sama bagi kedua pihak. Tujuan politik, bagaimanapun benarnya, tidak dapat membenarkan segala cara. Cara-cara perang yang dijalankan oleh semua pihak yang mengangkat senjata dalam konflik, harus tunduk terhadap berbagai ketentuan hukum kemanusiaan internasional. Komisi telah menerapkan berbagai standar yang relevan secara objektif dan seimbang terhadap semua pihak dalam menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, serta dalam membuat temuan mengenai persoalan tanggung jawab dan pertanggungjawaban.

* Lampiran A bagian ini mempunyai analisa yang lebih lengkap tentang hukum humaniter internasional.

† Lampiran A menjelaskan aturan yang mengatur perilaku dalam konflik bersenjata.

Prosedur Rekonsiliasi Komunitas

50. Bagian IV dari Peraturan memberi Komisi mandat untuk menjalankan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK). Bagian 9 Laporan ini memberikan penjelasan terperinci mengenai program PRK Komisi.

51. Tujuan umum PRK adalah:

membantu penerimaan dan reintegrasi orang-orang ke dalam komunitas mereka... sehubungan dengan tindakan kriminal atau non-kriminal yang dilakukan dalam konteks konflik politik di Timor-Leste antara 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999.⁴¹

52. Peraturan mengatur secara umum prosedur PRK, tetapi juga memungkinkan penyesuaian dengan kondisi setempat. Prosedur dasarnya adalah sebagai berikut:

53. Siapa pun yang telah melakukan tindakan atau kejahatan “ringan” yang telah merugikan komunitas mereka dan berkaitan dengan konflik politik dapat memberikan kepada Komisi pernyataan yang menjelaskan aksi mereka secara terperinci.⁴² Pernyataan tersebut kemudian dipertimbangkan oleh sebuah Komite dalam Komisi sebelum diteruskan kepada Kejaksaan Agung dengan disertai rekomendasi yang memerinci mengapa kasus tersebut layak untuk ditangani melalui PRK. Dalam waktu dua minggu, Kejaksaan Agung harus memberikan pemberitahuan tertulis apabila Kejaksaan Agung bermaksud menerapkan yurisdiksi eksklusifnya atas ‘pelanggaran pidana berat’ dalam kaitannya dengan kasus tersebut. Apabila Kejaksaan Agung memutuskan untuk tidak menerapkan yurisdiksinya, kasus tersebut akan dikembalikan kepada Komisi untuk diproses.⁴³

54. Kewenangan atas kasus tersebut kemudian didelegasikan kepada Komisaris Regional, yang harus membentuk panel beranggotakan tiga hingga lima pemimpin setempat dari komunitas tempat kejadian-kejadian tersebut berlangsung. Komisaris Regional bertindak sebagai ketua panel. Sebuah audiensi diselenggarakan, dan di dalamnya deponen memberikan kesaksian dan ditanyai oleh panel. Para korban dan anggota komunitas diberi kesempatan berbicara dalam audiensi tersebut.⁴⁴

55. Pada akhir audiensi, panel mempertimbangkan dan memutuskan ‘tindakan rekonsiliasi’, seperti kerja bakti, permintaan maaf di hadapan publik, atau reparasi, yang dianggap tepat untuk dilakukan deponen agar ia dapat diterima kembali ke dalam komunitasnya.⁴⁵ Apabila deponen setuju menjalankan tindakan-tindakan tersebut, panel akan menyusun suatu Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas yang ditandatangani oleh deponen dan panel.⁴⁶ Kesepakatan tersebut kemudian didaftarkan sebagai putusan pengadilan distrik yang bersangkutan.⁴⁷ Setelah memenuhi ‘Tindakan Rekonsiliasi’ yang diminta, deponen tersebut mendapat imunitas dari tuntutan pidana di masa depan atau tanggung jawab perdata yang timbul dari pelanggaran yang diungkapkan.⁴⁸

56. Peraturan memberikan berbagai contoh kasus yang layak ditangani melalui PRK, seperti pencurian, penganiayaan ringan, pembakaran, dan pembunuhan ternak atau

penghancuran tanaman pangan.⁴⁹ Wewenang untuk menyelenggarakan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas tidak mencakup tindakan apa pun yang akan memengaruhi wewenang eksklusif Kejaksaan Agung dan Panel Khusus Pengadilan Distrik Dili atas ‘pelanggaran pidana berat’ yakni pembunuhan, pelanggaran seksual, penyiksaan, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang.⁵⁰

Pendekatan Komisi yang berbasis komunitas

57. Kebanyakan komisi kebenaran yang lain diberi mandat untuk terutama memfokuskan diri pada tugas untuk menetapkan dan melaporkan kebenaran yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Satu pengecualian yang kentara adalah Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran Afrika Selatan, yang programnya meliputi audiensi amnesti. Di samping mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan informasi, sejumlah komisi yang lebih baru juga telah menyelenggarakan audiensi publik melalui tema yang relevan dengan kerja mereka.

58. Selain mencari dan melaporkan pelanggaran historis serta menyelenggarakan audiensi publik sebagai tema utama, Komisi juga menerapkan serangkaian program akar-rumput berbasis komunitas yang tujuannya adalah rekonsiliasi, memulihkan martabat para korban, dan memajukan hak asasi manusia.

59. Program-program ini mencakup Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK), audiensi publik lokal bagi para korban, lokakarya partisipatoris tentang sejarah pelanggaran hak asasi manusia dalam komunitas, lokakarya pemulihan korban, rancangan reparasi khusus bagi korban dengan kebutuhan mendesak, berbagai program radio yang berfokus pada persoalan rekonsiliasi lokal, dan program-program penerangan yang ditujukan bagi orang Timor-Leste di Timor Barat, Indonesia.

60. Komisi ini mengakui bahwa banyaknya dukungan dan pengakuan luas yang diterima Komisi dari penduduk Timor-Leste tidak lepas dari pendekatan berbasis komunitas yang dilakukan Komisi dalam melaksanakan mandatnya. Merumuskan, menyelenggarakan, dan menyelesaikan program yang demikian beragam memerlukan staf dan sumberdaya yang banyak. Namun, hal ini memberikan manfaat yang tak terduga dengan mendorong komunitas-komunitas kecil di seluruh wilayah untuk menjalankan kemitraan dengan Komisi dalam upaya mencari penyelesaian yang bersifat lokal bagi tantangan rekonsiliasi dan penyembuhan luka-luka yang disebabkan pelanggaran historis.

Lampiran: Prinsip-prinsip hukum yang relevan

Pendahuluan: Hukum internasional yang relevan dengan mandat Komisi

61. Dua jenis hukum perlu dipertimbangkan dalam menentukan makna ‘pelanggaran hak asasi manusia’ menurut definisi mandat. Pertama, hukum domestik yang berlaku di Timor-Leste dalam kurun waktu tertentu, baik hukum Portugis maupun hukum Indonesia. Yang kedua, hukum internasional, yang berisi berbagai prinsip yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan bagaimana suatu konflik bersenjata dijalankan.

62. Dua sumber utama hukum internasional adalah perjanjian dan ‘hukum kebiasaan.’ Perjanjian hanya mengikat negara yang ikut serta dalam perjanjian tersebut.

63. Hukum kebiasaan internasional merupakan kodifikasi hukum yang bersifat lebih umum, yang terdiri atas aturan-aturan yang telah diterima dan diterapkan oleh sebagian besar masyarakat internasional. Aturan-aturan hukum kebiasaan internasional umumnya mengikat semua negara.[†]

64. Resolusi badan-badan PBB juga relevan untuk hukum internasional. Para anggota PBB (termasuk Indonesia dan Portugal) terikat untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan.⁵¹ Meskipun resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengikat negara-negara, resolusi itu relevan dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional,⁵² dan mewakili pandangan masyarakat Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Indonesia sebagai salah satu anggotanya.

65. Dalam mempertimbangkan bagian hukum internasional yang relevan dengan mandatnya, Komisi kadang perlu mempertimbangkan status wilayah Timor-Leste selama periode mandatnya. Untuk maksud ini, Komisi mengikuti pandangan Perserikatan Bangsa-bangsa⁵³ bahwa Timor-Leste tetap merupakan suatu wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri di bawah administrasi Portugal sepanjang periode tersebut. Jelas bahwa Indonesia tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut. Menurut hukum internasional, kedaulatan suatu wilayah tidak dapat diperoleh melalui penggunaan kekerasan secara tidak sah.⁵⁴ Integrasi yang diklaim Indonesia tidak memenuhi persyaratan apa pun yang ditentukan oleh Sidang Umum tentang integrasi sukarela dari suatu wilayah yang tak berpemerintahan sendiri ke dalam negara lain.[‡]

* Lihat Artikel 38(1) Statuta Pengadilan Internasional. Sumber lain termasuk prinsip umum yang diakui dalam sistem hukum berbagai negara; tulisan para penulis hukum yang dihormati, dan keputusan pengadilan internasional.

† Satu-satunya perkecualian ialah saat suatu negara terus-menerus merasa keberatan dengan aturan kebiasaan yang tidak fundamental: *Fisheries Case* atau *Kasus Perikanan (Inggris melawan Norwegia)* (1951) Laporan ICJ 116 hal. 131.

‡ Resolusi Sidang Umum 1541 (XV), 15 Desember 1960, mengakui bahwa hal ini bisa terjadi jika: 1)

Berbagai standar hak asasi manusia internasional

66. Komisi diberi mandat untuk mempertimbangkan pelanggaran terhadap ‘standar-standar hak asasi manusia internasional’.⁵⁵ Standar ini didefinisikan sebagai “standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang tercantum dalam Pasal 2 Regulasi UNTAET No. 1/1999.”⁵⁶ Pasal itu mengacu kepada “standar-standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional, sebagaimana tecermin, khususnya dalam:

- Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, tertanggal 10 Desember 1948;
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, tertanggal 16 Desember 1966, dan protokol-protokolnya;
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, tertanggal 16 Desember 1966;
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, tertanggal 12 Desember 1965;
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, tertanggal 17 Desember 1979;
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, tertanggal 17 Desember 1984;
- Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak, tertanggal 20 November 1989.”

67. Regulasi UNTAET 1/1999 mengacu kepada berbagai standar yang diakui secara internasional “sebagaimana tecermin khususnya dalam” berbagai instrumen internasional di atas. Karena acuan ini bersifat inklusif terhadap—namun tidak terbatas pada—instrumen-instrumen tersebut, mandat Komisi mencakup “berbagai standar yang diakui secara internasional” lainnya yang ada dalam berbagai instrumen internasional di luar daftar ini.

68. Selama periode mandat, Indonesia telah meratifikasi instrumen-instrumen berikut:

- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (13 September 1984)
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (28 Oktober 1998)
- Konvensi tentang Hak-hak Anak (5 September 1990) (Namun, ratifikasi perjanjian ini disahkan dengan syarat bahwa ini akan berlaku terhadap

wilayah yang diintegrasikan telah mencapai tahap pemerintahan sendiri yang maju dengan institusi politik bebas, agar warganya mempunyai kapasitas untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab melalui proses yang demokratis dan berdasar pemahaman penuh; dan 2) integrasi merupakan hasil dari ekspresi bebas warga wilayah tersebut yang bertindak dengan pemahaman penuh mengenai perubahan status mereka; keinginan mereka diekspresikan melalui proses yang demokratis dan penuh pemahaman, yang dilakukan secara adil dan berdasarkan pada pemilihan umum.

Indonesia sejauh masih konsisten dengan Undang-Undang Dasar Indonesia dan perjanjian ini tidak akan memberi hak yang tidak diberi oleh Undang-Undang Dasar tersebut)

69. Selama periode mandat, Portugal telah meratifikasi atau menerima instrumen-instrumen berikut:

- Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (15 Juni 1978)
- Protokol Opsional Kedua tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati (17 Oktober 1990)
- Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (31 Juli 1978)
- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (24 Agustus 1982)
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (9 Februari 1989)
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (30 Juli 1980)
- Konvensi tentang Hak-hak Anak (21 September 1990)

70. Penting untuk diperhatikan juga bahwa berbagai standar hak asasi manusia internasional masih tetap relevan bahkan dalam situasi konflik bersenjata. Berbagai standar ini berlaku berdampingan dengan hukum kemanusiaan internasional.⁵⁷ Lebih lanjut, tanggung jawab hak asasi manusia suatu negara berlaku atas perilakunya di luar wilayah negaranya sendiri, termasuk di dalam wilayah asing mana pun yang didudukinya.⁵⁸

Hak atas penentuan nasib sendiri

71. Tidak diragukan lagi bahwa hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri ada dalam hukum internasional. Hak tersebut dijamin oleh Pasal 1 yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (the International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) dan telah dikukuhkan oleh Sidang Umum PBB.⁵⁹ Hak ini telah berulang-kali diakui oleh Mahkamah Internasional sebagai hak yang ada dalam hukum kebiasaan.⁶⁰ Kewajiban negara-negara untuk menghormati

.....
* Lihat, yang terbaru, *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) ICJ pada poin 14 dari 15 hakim menyebut hak menentukan nasib sendiri: lihat keputusan pengadilan paragraf 88 dan 155-156; Pendapat terpisah dari Hakim Koroma paragraf 5; Pendapat terpisah dari Hakim Higgins paragraf 18 dan 28-31; Pendapat terpisah Hakim Kooijmans paragraf 6 dan 31-33; Pendapat terpisah Hakim Al-Khasawneh paragraf 9; Pendapat terpisah Hakim Buergenthal paragraf 4; dan pendapat terpisah Hakim Elaraby paragraf 3.4; juga

hak ini begitu pentingnya sehingga dikatakan bahwa ini merupakan kewajiban masyarakat internasional sebagai suatu keseluruhan, atau kewajiban semua negara (“*erge omnes*”).⁶⁰ Komite Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa:

Hak atas penentuan nasib sendiri begitu penting karena perwujudan hak ini merupakan prasyarat penting adanya jaminan dan perlindungan yang efektif atas hak-hak perorangan dan untuk memajukan serta memperkuat hak-hak tersebut.⁶¹

72. Hak ini dikatakan dimiliki oleh “segala bangsa”. Hak tersebut tidak hanya berlaku bagi penduduk berbagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri (yakni, rakyat yang berada di bawah kekuasaan kolonial), tetapi juga bagi mereka yang hidup di bawah pendudukan asing.⁶² Rakyat Timor-Leste, kini dan selama periode mandat, adalah rakyat yang memiliki hak menentukan nasib sendiri. Antara Desember 1975 dan 1982, Sidang Umum PBB telah mengesahkan delapan resolusi⁶³ dan Dewan Keamanan mengesahkan dua resolusi lainnya⁶⁴ yang mengakui hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan.

73. Hakikat hak tersebut ialah hak suatu bangsa untuk mengungkapkan kehendaknya dengan bebas. Hal ini melibatkan sedikitnya dua hak utama seperti dijelaskan dalam Pasal 1 yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yakni:

1. hak suatu bangsa untuk berpartisipasi secara bebas dalam suatu proses yang memungkinkan mereka dapat secara bebas menentukan status politiknya, dan
2. hak suatu bangsa untuk ambil bagian dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya serta mengatur kekayaan serta sumberdaya alam yang dimilikinya.

74. Pasal 1(2) yang sama dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatakan:

Semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka sendiri, bebas mengelola kekayaan dan sumberdaya alam mereka tanpa memengaruhi berbagai kewajiban yang muncul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Bagaimana pun, suatu bangsa tidak boleh dirampas sarana kehidupannya.

dalam *Case Concerning Timor-Leste (Portugal v Australia)* (1995) Laporan ICJ 90 hal. 102, paragraf 29; dan *Advisory Opinion of 16 October 1975 (“Western Sahara”)* (1975) Laporan ICJ 12 paragraf 55-59; lihat juga *Advisory Opinion on the Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)* (1971) Laporan ICJ 16, paragraf 52-53.

75. Negara-negara diwajibkan untuk menghormati dan mendukung hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri⁶⁵ dan untuk mengambil tindakan positif untuk membantu terwujudnya hak tersebut.⁶⁶ Komite Hak Asasi Manusia mengatakan:

[S]ecara khusus, Negara-negara harus menahan diri untuk tidak ikut campur dalam berbagai masalah dalam negeri Negara-negara lain yang dengan demikian akan menghalangi penerapan hak atas penentuan nasib sendiri.⁶⁷

76. Walaupun dalam beberapa kasus mungkin terdapat berbagai kesulitan untuk menentukan apakah suatu tindakan tertentu yang menghalangi penentuan nasib sendiri telah melanggar kewajiban tersebut,⁶⁸ tidak diragukan lagi bahwa pelanggaran terjadi dalam kasus invasi dan pendudukan militer. Pandangan ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional yang, mengutip sebuah resolusi Sidang Umum, mengamati bahwa:

Setiap Negara memiliki tugas untuk tidak melakukan tindak pemaksaan yang merampas dari suatu bangsa...hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.⁶⁹

77. Jika terjadi pengingkaran terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri, negara-negara lain dalam komunitas internasional berkewajiban mengakui ketidaksahan situasi itu (atau berkewajiban untuk tidak mengakuinya sebagai sesuatu yang sah) dan tidak boleh mengambil tindakan apa pun yang menolong atau membantu melestarikannya.⁷⁰

Pembunuhan di luar hukum

78. Hak untuk hidup dilindungi oleh Pasal 3 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (UDHR), dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Instrumen internasional tersebut mengikat semua negara sebagai suatu aturan hukum kebiasaan internasional.⁷¹ Bahkan ketika keadaan darurat mengancam kehidupan suatu bangsa, kewajiban yang berkait dengan hak untuk hidup tidak boleh dibatasi dengan cara apa pun (“dihapuskan”).⁷²

79. Pasal 6(1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa:

Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi hukum. Tidak seorang pun dapat direnggut kehidupannya secara sewenang-wenang.

80. Pemerintah suatu negara hanya diizinkan untuk mengambil nyawa seseorang di negara-negara tempat hukuman mati berlaku setelah hukuman ini dijatuhkan dalam proses peradilan yang adil oleh pengadilan yang kompeten sesuai hukum,⁷³

dan hukuman mati ini dijalankan dengan cara yang meminimalkan penderitaan fisik dan mental.’

81. Pembunuhan di luar hukum jelas merupakan pelanggaran terhadap hak atas hidup. Komisi Hak Asasi Manusia, yang mengawasi pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, telah berkomentar:

Perlindungan terhadap penghilangan hidup seseorang secara sewenang-wenang, yang secara eksplisit diwajibkan oleh kalimat ketiga Pasal 6 (1), merupakan suatu hal yang sangat penting. Komisi berpandangan bahwa Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah tidak hanya untuk mencegah dan menghukum penghilangan nyawa seseorang melalui tindakan kriminal, tapi juga mencegah pembunuhan sewenang-wenang oleh aparat keamanannya sendiri. Penghilangan nyawa oleh pemerintah suatu Negara merupakan masalah yang teramat berat. Karena itu, hukum harus secara tegas mengontrol dan membatasi situasi saat seseorang bisa dihilangkan nyawanya oleh pemerintah suatu negara.⁷⁴

82. Satu situasi saat kematian tidak melanggar hak hidup ialah jika hal itu terjadi dalam suatu konflik bersenjata dan sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Namun, pengecualian ini hanya berlaku bagi pembunuhan terhadap petempur serta kematian penduduk sipil yang tidak disengaja sebagai akibat dari tindakan militer yang proporsional dan perlu. Pembunuhan sengaja terhadap penduduk sipil atau tahanan tetap merupakan pelanggaran hukum internasional. Lebih jauh lagi, Komisi Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa dalam konteks hak untuk hidup, negara memiliki “tugas mulia untuk mencegah peperangan, tindakan genosida, dan tindak-tanduk kekerasan massal lainnya yang menyebabkan hilangnya nyawa secara sewenang-wenang.”⁷⁵

Penghilangan

83. Menyebabkan hilangnya seseorang merupakan pelanggaran sejumlah hak dasar manusia. Komisi Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa negara-negara diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah khusus dan efektif untuk mencegah penghilangan orang, dan harus menyusun prosedur untuk menyelidiki kasus-kasus orang hilang.⁷⁶ Komite mengatakan bahwa:

Tindakan penghilangan semacam ini merupakan pelanggaran banyak hak yang tertuang dalam Kovenan, termasuk hak atas kebebasan dan keamanan seseorang (Pasal 9), hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain

* Kalau tidak, hukuman mati bisa melanggar larangan atas penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat: lihat misalnya Komisi Hak Asasi Manusia, Komentar Umum 20, paragraf 61; *Ng v Canada* (1994) HRC Comm No. 469/1991, paragraf 16.2

yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7), dan hak setiap orang yang dihilangkan kebebasannya untuk diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat manusia (Pasal 10). Tindakan itu juga melanggar atau merupakan ancaman berat terhadap hak atas hidup (Pasal 6).⁷⁷

84. Hak-hak lain, seperti hak untuk diakui sebagai pribadi manusia di muka hukum (Pasal 16 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), mungkin juga dilanggar.⁷⁸ Selain melanggar hak asasi korban, penghilangan dapat menyebabkan penderitaan batin yang mendalam pada kerabat korban sehingga bisa juga merupakan pelanggaran terhadap larangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.⁷⁹ Dari sudut pandang kerabat yang ditinggalkan, penghilangan juga merupakan pelanggaran hak atas kehidupan berkeluarga, dan bilamana suatu keluarga bergantung secara ekonomi pada orang yang hilang tersebut, hal ini dapat juga menjadi pelanggaran berbagai hak sosial dan ekonomi seperti hak atas standar hidup yang layak (Pasal 11 ICESPR) dan hak atas pendidikan (Pasal 13 ICESPR).⁸⁰

Pemindahan, pemukiman kembali, dan kelaparan

85. Menurut UDHR dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, semua orang memiliki hak atas kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat bermukim.⁸¹ Pembatasan terhadap hak-hak ini hanya diperbolehkan di dalam sebuah negara demokratis untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, atau kesusilaan, atau hak-hak orang lain, dan pembatasan apa pun harus ditentukan oleh undang-undang, dan tidak berlawanan dengan hak-hak manusia lainnya.⁸²

86. Setiap orang berhak atas pangan yang layak⁸³ dan bebas dari kelaparan.⁸⁴ Hak ini berarti bahwa harus tersedia makanan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap individu.⁸⁵ Negara tidak hanya berkewajiban mengambil langkah-langkah untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini,⁸⁶ tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap orang yang berada di bawah wewenang negara memiliki akses ke bahan pangan pokok untuk memastikan bahwa rakyat bebas dari kelaparan.⁸⁷ Negara mungkin melanggar kewajiban ini secara langsung atau tidak langsung, misalnya dengan mengambil berbagai kebijakan yang secara jelas tidak sejalan dengan hak rakyat atas pangan.⁸⁸

87. Setiap orang juga memiliki hak atas air⁸⁹ dan atas perumahan yang layak.⁹⁰ Yang paling penting, setiap orang memiliki hak atas hidup.⁹¹ Komisi Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa hak ini seharusnya tidak ditafsirkan secara sempit, dan hak ini termasuk kewajiban bagi negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, misalnya untuk mengurangi malnutrisi.⁹²

88. Selain prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia ini, hukum kemanusiaan internasional juga mencakup beberapa ketentuan penting mengenai pemindahan dan kelaparan (lihat di bawah).

Penahanan sewenang-wenang

89. Hak atas kebebasan pribadi dilindungi oleh Pasal 3 UDHR dan Pasal 9(1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hak tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebebasan fisik seseorang tidak dibatasi secara sewenang-wenang.⁹³ Pasal 9 UDHR dan Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, secara lebih spesifik, melarang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Larangan ini juga tertuang dalam hukum kebiasaan internasional⁹⁴ dan karena itu mengikat semua negara.

90. Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mengandung hak-hak spesifik berikut yang berlaku terhadap segala jenis perampasan kebebasan:

1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan sewenang-wenang. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan-alasan dan menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.
2. Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu pada saat penangkapan tentang alasan penangkapannya dan segala tuduhan terhadapnya.
3. Siapa pun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus segera dihadapkan di muka hakim atau pejabat lainnya yang diberi wewenang menurut hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan harus berhak atas pengadilan dalam suatu jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Tidak boleh menjadi suatu aturan umum untuk tetap menahan seseorang yang sedang menunggu sidang pengadilan, tapi pembebasan dapat diberikan dengan syarat adanya jaminan bahwa ia akan hadir dalam sidang-sidang pengadilan pada setiap tingkatan proses peradilannya dan, jika saatnya tiba, untuk eksekusi putusan pengadilannya.
4. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan berhak untuk membawa perkaranya ke hadapan pengadilan, agar pengadilan tersebut segera memutuskan tentang keabsahan penahanannya atau memerintahkan pembebasannya jika penahanan itu tidak sah.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah harus memiliki hak atas ganti rugi yang dapat dilaksanakan.

91. Penahanan akan terjadi sewenang-wenang, dan karenanya melanggar standar-standar hak asasi manusia, dalam sejumlah situasi. Kasus yang paling jelas adalah ketika penahanan tidak sesuai dengan hukum nasional. Sebagai tambahan, Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang menyatakan bahwa penahanan yang melanggar standar-standar hak asasi manusia lainnya juga dianggap sewenang-wenang. Kelompok Kerja ini menganggap suatu penahanan sewenang-wenang:

1. bilamana tidak terdapat dasar hukum yang dapat membenarkan penahanan itu;
2. ketika penahanan terjadi akibat penerapan hak-hak fundamental yang sah menurut hukum (sebagai contoh, kebebasan mengungkapkan atau memiliki pendapat);
3. ketika situasinya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang demikian parah sehingga penahanan tersebut dapat dianggap sebagai sewenang-wenang (sebagai contoh, ketika tidak ada proses pengadilan yang layak atau suatu pengadilan yang adil).⁹⁵

92. Lebih umum lagi, Komisi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa penahanan yang seharusnya sesuai hukum pun masih dapat dianggap sewenang-wenang dan melanggar Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik jika tidak beralasan atau tidak diperlukan dalam situasi tertentu.⁹⁶ Penahanan juga dapat terjadi sewenang-wenang, jika telah melampaui titik saat penahanan tersebut masih beralasan atau masih diperlukan dalam situasi tertentu.⁹⁷

93. Dalam kasus saat seseorang ditangkap atau ditahan dengan dakwaan pidana, orang tersebut harus segera (dalam beberapa hari)⁹⁸ dihadapkan pada hakim dan harus diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan.⁹⁹

94. Penahanan prasidang harus menjadi pengecualian, dan harus sesingkat mungkin.¹⁰⁰ Yang juga penting, Komisi Hak Asasi Manusia juga menekankan bahwa:

(J)ika apa yang disebut sebagai penahanan preventif digunakan untuk alasan keamanan publik, hal itu harus diatur dengan ketentuan-ketentuan yang sama seperti di atas, misalnya penahanan tersebut tidak boleh sewenang-wenang dan harus berdasar pada alasan-alasan dan prosedur yang diatur oleh undang-undang (Paragraf 1), alasan-alasan penahanan tersebut harus diberitahukan (Paragraf 2), dan harus ada kontrol pengadilan terhadap penahanan tersebut (Paragraf 4) serta kompensasi dalam hal terjadinya kekeliruan (Paragraf 5). Dan jika, sebagai tambahan, dakwaan pidana diajukan dalam kasus semacam ini, perlindungan penuh dari Pasal 9 (2) dan (3), serta Pasal 14 [yang mencakup hak atas peradilan yang adil], juga harus diberikan.¹⁰¹

Kondisi pemenjaraan

95. Pasal 10(1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa:

Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi, dan dengan menghormati harkat dan martabat yang melekat pada diri manusia.¹⁰²

96. Komisi Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa ketentuan ini mencerminkan “norma hukum internasional umum,”¹⁰³ dan bahwa ini “tidak boleh menyimpang dari norma-norma tersebut.”¹⁰⁴ Komisi menafsirkan ketentuan tersebut dalam arti, antara lain, bahwa setiap orang dalam tahanan tidak boleh mengalami penderitaan atau pembatasan apa pun selain yang diakibatkan oleh dicabutnya hak atas kebebasannya, dan harus diperkenankan untuk menikmati semua hak asasi manusia dengan keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa dihindari dalam suatu lingkungan tertutup.¹⁰⁵

97. Jika perlakuan dalam penahanan tidak memenuhi standar minimum, hal tersebut juga merupakan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Secara khusus, masa penahanan dalam sel isolasi atau penahanan *incommunicado* (tanpa hubungan luar) yang berlarut-larut dapat melanggar standar-standar tersebut.¹⁰⁶ Komisi Hak Asasi Manusia juga telah mengamati bahwa:

(S) standar-standar minimum tertentu mengenai kondisi penahanan harus ditaati tanpa memandang tingkat pencapaian pembangunan Negara peserta. Ini mencakup, sesuai dengan Peraturan 10, 12, 17, 19, dan 20 dalam Peraturan Standar Minimum PBB untuk Perlakuan Tahanan, ukuran minimum ruangan dan volume kubik udara bagi setiap tahanan, fasilitas jamban yang memadai, pakaian pantas yang tidak merendahkan martabat manusia atau memalukan, penyediaan tempat tidur sendiri, dan penyediaan makanan yang bergizi yang memadai bagi kesehatan dan kekuatan. Harus dicatat bahwa ini merupakan syarat-syarat minimum yang menurut Komisi harus selalu ditaati, bahkan ketika pertimbangan ekonomi dan anggaran menyulitkan ketaatan terhadap berbagai kewajiban ini.¹⁰⁷

Penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat

98. Pasal 5 UDHR dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa tidak seorang pun bisa dijadikan sasaran penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Penyiksaan juga dilarang menurut hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara.¹⁰⁸ Larangan tersebut demikian pentingnya sehingga “berada di jenjang yang lebih tinggi dalam hierarki internasional daripada hukum perjanjian dan bahkan aturan-aturan ‘umum’ kebiasaan” (dengan kata lain, hal ini merupakan ‘norma *jus cogens*’), dan tidak dapat dihindari (“dikurangi”) dalam keadaan apa pun.¹⁰⁹

.....
* melanggar Pasal 5 UDHR; Pasal 7 ICCPR, Pasal 16 CAT

99. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau yang Merendahkan Martabat (CAT, Convention against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment) (diratifikasi oleh Indonesia pada 28 Oktober 1998), menjelaskan secara lebih terperinci suatu aturan untuk mencegah serta menghukum penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, termasuk hal-hal berikut ini:

- Setiap negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyiksaan di dalam wilayah mana pun yang berada di bawah yurisdiksinya;¹¹⁰
- Setiap negara juga harus mencegah terjadinya perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat, oleh atau atas persetujuan pejabat pemerintah;¹¹¹
- Keadaan apa pun, seperti perang atau keadaan darurat umum, tidak dapat dijadikan pembenaran bagi tindakan penyiksaan;¹¹²
- Setiap negara harus menjadikan penyiksaan sebagai pelanggaran menurut hukum pidananya;¹¹³
- Kasus-kasus tuduhan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat harus diselidiki dengan segera dan tidak memihak;¹¹⁴
- Setiap negara harus mendidik seluruh aparat penegak hukum sipil dan militer dan para pejabat pemerintah mengenai larangan penyiksaan, dan harus meninjau kembali secara sistematis peraturan-peraturan dan praktik yang berkaitan dengan interogasi dan penahanan tahanan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat;¹¹⁵
- Pernyataan apa pun yang dibuat akibat penyiksaan tidak dapat dijadikan sebagai bukti;¹¹⁶

100. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau yang Merendahkan Martabat mendefinisikan terjadinya penyiksaan apabila terdapat setiap unsur berikut:

- perbuatan dilakukan yang dengan sengaja mengakibatkan sakit atau penderitaan hebat;
- perbuatan dilakukan dengan tujuan menghukum, mengintimidasi, memaksa, atau mendapatkan informasi atau pengakuan, atau atas dasar diskriminasi dalam bentuk apa pun;
- perbuatan dilakukan oleh atau atas anjuran seorang pejabat pemerintah, atau dengan sepengetahuan atau persetujuan seorang pejabat pemerintah.*

* Pasal 1(1) CAT menyatakan bahwa penyiksaan berarti "tindakan apa pun, saat sakit atau penderitaan berat, baik fisik maupun mental, secara sengaja dilakukan terhadap seseorang untuk tujuan seperti mendapatkan dari orang tersebut atau orang ketiga informasi atau pengakuan, menghukum orang tersebut untuk tindakan yang dia atau orang ketiga lakukan atau ditengarai melakukan, atau mengintimidasi atau memaksa dia atau orang ketiga, atau atas alasan apa pun berdasar diskriminasi,

101. Definisi ini tidak menganggap suatu tindakan sebagai penyiksaan jika hal ini dilakukan oleh aktor nonpemerintah, seperti anggota partai oposisi atau milisi, kecuali jika hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan atau persetujuan pemerintah.¹¹⁷ Namun, dalam kasus-kasus saat negara tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi, faksi-faksi atau organisasi-organisasi yang secara *de facto* menjalankan fungsi-fungsi layaknya pemerintah dapat dianggap sebagai pejabat publik.¹¹⁸ (Pengecualian ini memungkinkan definisi tersebut untuk diterapkan pada berbagai tindakan yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil setidaknya di berbagai wilayah, dan pada saat mereka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan karena tidak adanya otoritas lain.) Definisi CAT dinyatakan sudah mencerminkan hukum kebiasaan internasional.¹¹⁹

102. Definisi penyiksaan adalah serupa menurut berbagai instrumen hak-hak asasi manusia yang lain. Komisi Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa apakah suatu perilaku merupakan penyiksaan bergantung pada “sifat, tujuan, dan tingkat keparahan dari perlakuan yang diterapkan.”¹²⁰ Namun, satu hal yang membedakan adalah bahwa konsep penyiksaan menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak mensyaratkan keterlibatan atau persetujuan dari seorang pejabat publik. Menurut Komisi Hak Asasi Manusia:

Adalah tugas Negara peserta untuk menyediakan perlindungan bagi setiap orang melalui undang-undang dan berbagai langkah lain yang diperlukan dari berbagai tindakan yang dilarang oleh Pasal 7, baik yang dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resminya, di luar kapasitas resmi mereka, atau dalam kapasitas pribadi.¹²¹

103. Meskipun tidak ada perjanjian yang mendefinisikan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, namun dipahami bahwa hal ini juga mencakup berbagai tindakan yang tidak dapat dianggap penyiksaan karena tindakan-tindakan itu tidak dilakukan untuk tujuan tertentu atau tidak cukup parah. Hal ini termasuk contohnya, penyekapan di ruang terisolasi,¹²² menghambat tidur,¹²³ mengekang seseorang dalam posisi yang menyakitkan,¹²⁴ menutup kepala seseorang dengan tudung,¹²⁵ dan mengancam seseorang untuk dibunuh.¹²⁶

104. Menurut Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau yang Merendahkan Martabat, negara-negara diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat hanya jika hal itu melibatkan atau disetujui oleh seorang pejabat publik.¹²⁷ Kewajiban menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik lebih luas

ketika sakit atau penderitaan hebat tersebut dilakukan atau diakibatkan oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat negara atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas negara. Penyiksaan tidak termasuk sakit atau penderitaan yang muncul hanya dari sanksi sah yang tidak sengaja atau yang tersirat.” Definisi ini tidak memihak kepada definisi instrumen internasional apa pun atau undang-undang nasional yang mempunyai penerapan lebih luas: Pasal 1(2) CAT.

dan menuntut negara-negara untuk mengambil langkah untuk mencegah perlakuan semacam itu bahkan ketika dilakukan oleh kelompok-kelompok nonpemerintah atau perorangan.¹²⁸

Pengadilan yang tidak adil

105. Hak atas proses peradilan yang layak, dan pengadilan yang adil menurut hukum hak asasi manusia internasional dijamin oleh Pasal 10 dan 11 UDHR, dan Pasal 14 dan 15 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

106. Beberapa ketentuan juga relevan untuk prosedur-prosedur prasidang. Seseorang yang ditangkap karena tuduhan pidana harus sesegera mungkin diberitahu, dengan bahasa yang bisa dia mengerti, tentang tuduhan pidana terhadapnya,¹²⁹ dan sesegera mungkin diberi kesempatan untuk menghubungi pengacara yang dipilihnya sendiri.^{*} Dia harus dihadapkan di muka hakim, dalam waktu beberapa hari,[†] dan harus diadili dalam suatu jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan.¹³⁰ Waktu dan fasilitas yang cukup harus diberikan kepada tersangka guna mempersiapkan pembelaannya di muka pengadilan.¹³¹ Hal ini termasuk memberikan akses kepada tersangka ke berbagai dokumen dan bukti lain yang diperlukan untuk persiapan perkaranya, serta kesempatan untuk berkomunikasi dengan pengacaranya.¹³²

107. Tersangka harus diadili tanpa penundaan yang tidak perlu.¹³³ Pengadilannya harus di hadapan sebuah “pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak yang dibentuk menurut undang-undang.”[‡] Sidang pengadilan harus adil.¹³⁴ Menurut Komisi Hak Asasi Manusia, “suatu aspek dasar dari prinsip pengadilan yang adil adalah perimbangan kekuatan antara jaksa penuntut dan pembela.”¹³⁵ Ini berarti bahwa pembela harus diberi akses terhadap sumber-sumber informasi yang sama dengan jaksa penuntut, dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan perkaranya. Prinsip ini akan dilanggar, contohnya, ketika pihak penuntut menahan para saksi tanpa alasan khusus yang membenarkan tindakan semacam itu.¹³⁶ Jaksa penuntut juga tidak diperbolehkan untuk memakai bukti yang diperoleh melalui penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.¹³⁷

.....
^{*} Artikel 14(3)(b) ICCPR; lihat misalnya *Kelly v Jamaica* (1996) HRC Comm No 537/1993, paragraf 9.2, saat keterlambatan lima hari dalam mendapatkan akses kepada pengacara setelah ditangkap dianggap melanggar Artikel 14(3)(b).

[†] Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 8 paragraf 2; Lihat juga *Jijon v Ecuador* (1992) HRC Comm. No. 227/88 saat keterlambatan lima hari dalam menghadapkan tahanan kepada hakim dianggap melanggar Artikel 9(3).

[‡] Artikel 14(1) ICCPR; lihat juga *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, yang dirumuskan dalam Kongres Ketujuh PBB tentang Pencegahan Tindak Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, yang berlangsung di Milan dari 26 Agustus sampai 6 September 1985 dan disahkan melalui Resolusi Majelis PBB 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985; lihat juga *Guidelines on the Role of Prosecutors*, yang dirumuskan oleh Kongres Kedelapan PBB tentang Pencegahan Tindak Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, Havana, Cuba, tanggal 27 Agustus sampai tanggal 7 September 1990

108. Sidang pengadilan harus bersifat terbuka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus.¹³⁸ Hak atas sidang terbuka ini dapat dilanggar bahkan ketika secara teknis sudah “terbuka”, jika secara praktis sidang tersebut tidak dapat dihadiri oleh masyarakat.¹³⁹ Hal ini dapat mencakup situasi ketika publik secara efektif diintimidasi agar tidak menghadiri sebuah sidang.

109. Seorang tersangka memiliki hak khusus berikut selama dalam sidang:

- untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;¹⁴⁰
- untuk membela dirinya sendiri atau melalui pengacara pilihannya sendiri;¹⁴¹
- untuk memeriksa (sendiri atau melalui pengacaranya) para saksi yang memberatkan, dan untuk memanggil para saksi yang meringankan;¹⁴²
- untuk mendapatkan bantuan dari seorang juru bahasa apabila si tersangka tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;¹⁴³
- untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri atau mengaku salah.¹⁴⁴ Komisi Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa ketaatan terhadap hak ini mencakup:

Tidak adanya tekanan fisik atau psikologis baik langsung atau pun tidak langsung dari otoritas penyelidik terhadap si tersangka dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan bersalah. *A fortiori*, tidaklah pantas untuk memperlakukan seorang tersangka dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 7 dari Kovenan untuk memperoleh pengakuan.¹⁴⁵

110. Jika dinyatakan bersalah, seseorang berhak mengajukan banding atas hukuman dan vonis terhadap dirinya ke pengadilan yang lebih tinggi.¹⁴⁶ Alasan tertulis bagi keputusan yang dibuat harus diberikan dalam jangka waktu yang wajar oleh pengadilan banding untuk memudahkan banding ke tingkat yang lebih tinggi.¹⁴⁷

111. Tidak seorang pun boleh ditetapkan bersalah atas tindakan pidana terkait dengan perbuatan yang tidak merupakan pelanggaran pidana pada saat tindakan itu dilakukan.¹⁴⁸

Hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan berkumpul

112. Selain hak-hak prosedural ini, pengadilan politik sering melanggar hak asasi manusia yang lain. Ini mencakup, sebagai contoh:

1. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.¹⁴⁹
2. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai.¹⁵⁰

113. Tidak boleh ada pembatasan atau pengecualian terhadap hak seseorang atas kebebasan berpendapat.¹⁵¹ Pembatasan terhadap hak atas kebebasan

mengungkapkan pendapat, berserikat, dan berkumpul secara damai hanya dibolehkan dalam keadaan yang didefinisikan secara sempit. Keadaan-keadaan ini adalah:

- Pembatasan ini harus diatur dengan undang-undang;
- Pembatasan ini harus diterapkan untuk tujuan yang masuk akal (untuk menegakkan hak-hak orang lain atau untuk melindungi keamanan negara, ketertiban umum, kesehatan umum, atau kesusilaan umum);
- Pembatasan ini harus diperlukan untuk mencapai tujuan yang dapat diterima (dalam hal kebebasan berkumpul dan berserikat, langkah ini hanya dibolehkan jika diperlukan untuk mencapai tujuan “dalam suatu masyarakat demokratis”).¹⁵²

114. Sekadar pernyataan bahwa tindakan perlu diambil demi keamanan nasional tidaklah memadai kecuali jika ada penjelasan mengapa hal tersebut harus dilakukan.¹⁵³ Persyaratan ini harus dipatuhi secara tegas. Sebagai contoh, Komisi Hak Asasi Manusia telah mengatakan bahwa:

[Kebebasan mengeluarkan pendapat] adalah teramat penting dalam masyarakat demokratis mana pun dan pembatasan apa pun terhadap penerapannya harus sesuai dengan suatu uji pembenaran yang ketat.¹⁵⁴

Pemerksaan dan bentuk lain penyerangan/pelecehan seksual

115. Meskipun tidak ada instrumen hak asasi manusia yang secara khusus membahas pemerksaan dan penyerangan seksual, penganiayaan ini merupakan pelanggaran terhadap sejumlah standar hak asasi manusia. Yang paling nyata, kasus perksaan atau penyerangan seksual biasanya merupakan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.¹⁵⁵ Majelis Banding ICTY telah menyatakan bahwa:

Kekerasan seksual selalu menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang dalam, baik fisik atau pun mental, dan dengan demikian membenarkan hakikatnya sebagai suatu tindak penyiksaan.¹⁵⁶

116. Bagaimanapun, pemerksaan melanggar hak atas integritas jasmani yang dilindungi menurut hukum kebiasaan internasional.¹⁵⁷

117. Lebih jauh lagi, pemerksaan dan penyerangan seksual melanggar hak atas lingkup pribadi.¹⁵⁸ Bila dilakukan terhadap perempuan, pemerksaan melanggar hak perempuan untuk bebas dan dilindungi dari diskriminasi berbasis-gender,¹⁵⁹ yang salah satu bentuknya adalah kejahatan seksual terhadap perempuan. Komisi Hak Asasi Manusia telah mengatakan bahwa “perempuan sangat rentan pada masa-masa konflik bersenjata internal dan internasional,” dan bahwa negara-negara harus mengambil langkah-langkah “untuk melindungi perempuan dari perksaan, penculikan, dan bentuk kekerasan berbasis-gender lain.”¹⁶⁰

118. Banyak dari hak-hak tersebut dilindungi oleh Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Indonesia menjadi negara pesertanya pada 13 September 1984.

Perbudakan seksual

119. Kejadian-kejadian perbudakan seksual merupakan pelanggaran berulang terhadap semua hak yang telah dibahas di atas.

120. Baik UDHR maupun Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melarang segala bentuk perbudakan,¹⁶¹ mencerminkan aturan dasar dalam hukum kebiasaan internasional.¹⁶² Komisi Hak Asasi Manusia telah membahas berbagai permasalahan perbudakan seksual dalam konteks larangan itu.¹⁶³ Dalam lingkup hukum kemanusiaan internasional, perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dikatakan mencakup penerapan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang,¹⁶⁴ dan ini bisa mencakup kasus-kasus saat perempuan ditahan untuk jangka waktu yang lama dan berulang kali diserang secara seksual.*

121. Lebih jauh lagi, menurut Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, negara mempunyai kewajiban untuk mengambil segala tindakan untuk menekan segala bentuk perdagangan perempuan.¹⁶⁵

Hak anak

122. Selain dilindungi oleh standar-standar umum hak asasi manusia seperti yang berhubungan dengan hak atas hidup, pangan, bebas dari penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang, dan hak-hak sosial dan ekonomi, anak-anak dilindungi oleh aturan-aturan khusus tambahan dalam hukum hak asasi manusia internasional yang mencerminkan syarat dalam Pasal 25 UDHR bahwa masa kanak-kanak “berhak mendapat perlakuan khusus.”¹⁶⁶ Sebagian besar aturan tersebut tercantum dalam Konvensi tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC), meskipun beberapa aturan juga tertuang dalam berbagai instrumen internasional lain. Indonesia meratifikasi CRC pada 5 September 1990.†

123. Satu kewajiban yang paling utama adalah mendahulukan kepentingan terbaik bagi si anak sebagai pertimbangan utama ketika melakukan tindakan apa pun yang berhubungan dengan anak.¹⁶⁷

* Dalam *Prosecutor v Kunarac* perempuan ditahan dan berulang-ulang diperkosa dan diserang dan dipaksa melakukan pekerjaan di rumah tertuduh. Ini dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena melakukan perbudakan.

† Indonesia mencantumkan catatan bahwa negara ini akan menerapkan Konvensi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasarnya dan menolak kewajiban yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar tersebut.

124. Konvensi tentang Hak Anak menyatakan bahwa anak-anak berhak atas banyak hak yang diberikan secara lebih umum oleh instrumen lainnya, termasuk hak atas hidup,¹⁶⁸ hak untuk bebas dari penyiksaan,¹⁶⁹ hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang,¹⁷⁰ dan hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai, dan hak untuk memiliki akses terhadap berbagai fasilitas layanan kesehatan.¹⁷¹

125. Lebih khusus lagi, Konvensi tentang Hak Anak mewajibkan negara-negara peserta untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk penderitaan fisik atau mental,¹⁷² segala bentuk eksploitasi dan penganiayaan seksual,¹⁷³ serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.¹⁷⁴ Konvensi tentang Hak Anak juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu standar kehidupan yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.¹⁷⁵ Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di bawah umur 18 tahun.¹⁷⁶

126. Mengenai perekrutan anak-anak ke dalam organisasi militer atau paramiliter, standar berikut ini berlaku:

- Negara tidak boleh merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata, dan harus mengambil segala langkah untuk mencegah anak-anak di bawah umur 15 tahun mengambil bagian langsung dalam permusuhan.¹⁷⁷
- Jika merekrut anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata, negara-negara peserta harus memberi prioritas kepada mereka yang berusia lebih tua.¹⁷⁸
- Anak-anak memiliki hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi, dan dari melakukan pekerjaan yang mungkin berbahaya atau membahayakan bagi si anak.¹⁷⁹

127. Sejumlah standar lainnya yang tertuang dalam Konvensi tentang Hak Anak secara khusus relevan dengan pemindahan anak-anak Timor-Leste ke Indonesia. Sebagai contoh:

- Seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kemauan si anak, kecuali jika prosedur yang layak menyatakan bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan terbaik si anak;¹⁸⁰
- Negara harus mengambil tindakan untuk memerangi pemindahan gelap anak-anak ke luar negeri, dan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak-anak;¹⁸¹
- Negara harus mengatur proses adopsi dan memastikan bahwa adopsi dilakukan oleh pihak berwenang yang kompeten sesuai hukum;¹⁸²
- Pada saat seorang anak terpisahkan dari keluarganya, negara harus memberikan perlindungan khusus, dan sifat perlindungan ditentukan berdasarkan pada pertimbangan keberlanjutan pengasuhan seorang anak, serta latar belakang etnis, agama, budaya, dan bahasa si anak;¹⁸³

- Seorang anak berhak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarganya,¹⁸⁴

Hak sosial dan ekonomi

128. Hak ekonomi, sosial, dan budaya tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Beberapa juga tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (UDHR).

129. Hak-hak yang paling relevan dengan mandat CAVR adalah hak-hak berikut ini yang berlaku bagi semua orang:

- Hak untuk melakukan pekerjaan yang dipilih secara bebas,¹⁸⁵ dan atas kondisi kerja yang adil dan mendukung,¹⁸⁶ termasuk atas upah yang layak serta kondisi kerja yang aman dan sehat.¹⁸⁷
- Hak atas standar hidup yang layak bagi semua orang dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, dan perumahan yang layak, dan peningkatan kondisi hidup yang terus-menerus.¹⁸⁸
- Hak untuk dapat menikmati standar kesehatan fisik dan mental paling tinggi yang bisa dicapai.¹⁸⁹
- Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar wajib yang cuma-cuma.¹⁹⁰

130. Diakui bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya berbeda dari hak politik dan budaya karena pemenuhan hak-hak itu lebih bergantung pada sumberdaya yang dimiliki oleh suatu negara. Untuk alasan ini, berbagai kewajiban negara yang terkait dengan hak-hak yang dipaparkan di atas bukanlah kewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut secara absolut, tetapi lebih untuk mengambil langkah-langkah menuju pemaksimalan sumberdaya agar dapat memenuhi hak-hak yang sudah dijelaskan.¹⁹¹ Namun, hal ini tidak boleh ditafsirkan oleh negara sebagai alasan bagi ketidakpatuhannya dalam memenuhi berbagai kewajibannya. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESC) telah menekankan bahwa Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya memberlakukan dua kewajiban khusus terhadap negara, yakni:

1. Syarat bahwa hak-hak sosial dan ekonomi akan diterapkan tanpa diskriminasi (berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau yang lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status kelahiran, atau status yang lain)
2. kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang “terencana, nyata, dan terarah” untuk mewujudkan hak-hak yang tercantum dalam Kovenan.¹⁹²

131. Komisi juga telah mengisyaratkan bahwa Kovenan tersebut memberlakukan “suatu kewajiban pokok minimum untuk memastikan terpenuhinya setiap hak, setidaknya dalam tingkat minimum pokok,”¹⁹³ termasuk misalnya penyediaan “bahan pangan pokok, layanan kesehatan primer, tempat berlindung, dan perumahan sederhana, atau bentuk-bentuk pendidikan yang paling dasar.”¹⁹⁴

132. Juga penting untuk mengakui hubungan antara hak ekonomi dan sosial dan hak suatu bangsa atas penentuan nasib sendiri. Baik Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya maupun Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dalam memaparkan hak atas penentuan nasib sendiri, menyatakan bahwa suatu bangsa berhak secara bebas mengatur kekayaan dan sumberdaya alam bagi kebutuhan mereka sendiri, dan bahwa “suatu bangsa samasekali tidak boleh dirampas sumberdayanya untuk bertahan hidup.”¹⁹⁵

Hak reproduktif

133. Beberapa ketentuan hak asasi manusia bisa relevan dalam hal kontrol Indonesia terhadap tingkat kesuburan dan kasus-kasus KB paksa. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjamin hak laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga.¹⁹⁶ Berkenaan dengan hak tersebut Komisi, Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

Ketika Negara-negara peserta menjalankan kebijakan keluarga berencana, kebijakan tersebut harus sesuai dengan berbagai ketentuan Kovenan, khususnya, tidak boleh bersifat diskriminatif atau wajib.¹⁹⁷

134. CEDAW menjamin bagi perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam memutuskan secara bebas jumlah dan jarak kelahiran anak-anak mereka.¹⁹⁸ Hal ini dikatakan melibatkan larangan terhadap sterilisasi atau aborsi wajib, dan mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pemaksaan terhadap perempuan berkaitan dengan tingkat kesuburan mereka.¹⁹⁹

Hak asasi manusia dalam keadaan darurat nasional

135. Sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional memperbolehkan negara-negara untuk menanggukkan atau membatasi (“mengurangi”) untuk sementara kewajiban hak asasi manusia mereka ketika terjadi keadaan darurat nasional.²⁰⁰ Namun, hal ini hanya boleh dilakukan dalam situasi darurat yang paling gawat, dan terdapat berbagai pembatasan mengenai sejauh mana negara dapat mengambil langkah-langkah pengurangan ini.

136. Yang paling utama, beberapa hak asasi manusia samasekali tidak boleh ditanggukkan, bahkan dalam keadaan darurat yang paling gawat sekalipun. Hak-hak tersebut mencakup:

- hak atas hidup²⁰¹
- hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan serta penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat²⁰²
- hak untuk bebas dari perbudakan dan penghambaan²⁰³
- hak setiap orang yang ditahan untuk diperlakukan dengan manusiawi²⁰⁴

- hak atas suatu peradilan yang adil²⁰⁵
- hak untuk mengajukan acara hukum untuk mempertanyakan keabsahan suatu penahanan²⁰⁶

137. Bahkan ketika penangguhan dibolehkan, hal ini hanya boleh terjadi untuk sementara waktu, dan berbagai langkah khusus yang diambil harus benar-benar perlu dalam situasi tersebut.²⁰⁷

Hukum Kemanusiaan Internasional

Pendahuluan

138. Menurut mandat CAVR, definisi ‘pelanggaran hak-hak asasi manusia’ mencakup “pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional”.²⁰⁸ Hukum kemanusiaan internasional adalah kodifikasi hukum yang memaparkan berbagai aturan yang berlaku dalam suatu konflik bersenjata. Aturan-aturan ini berlaku bagi negara, kelompok bersenjata,²⁰⁹ dan individu.

139. Hukum kemanusiaan internasional berlaku hanya ketika ada suatu ‘konflik bersenjata’. Selain itu, aturan yang berlaku akan berbeda bergantung pada apakah konfliknya bersifat ‘internasional’ atau ‘internal’.

Keberadaan suatu konflik bersenjata

Kesimpulan:

140. Komisi menilai bahwa telah terjadi suatu konflik bersenjata di Timor-Leste dari 11 Agustus 1975, sampai setidaknya akhir mandat pada 25 Oktober 1999. Hukum kemanusiaan internasional dengan demikian berlaku sepanjang periode ini.

Alasan:

141. Adanya suatu konflik bersenjata tidak mensyaratkan suatu pernyataan perang atau bahkan pengakuan resmi dari pihak-pihak yang terlibat bahwa suatu keadaan konflik bersenjata sedang berlangsung. Pengujiannya adalah apakah terjadi permusuhan nyata dalam tingkat yang melampaui “kekacauan internal” semata.²¹⁰ Suatu konflik bersenjata terjadi:

Bilamana terjadi penggunaan kekuatan bersenjata antarnegara atau kekerasan bersenjata yang berlarut-larut antara otoritas pemerintahan dan kelompok bersenjata yang terorganisasi, atau antarkelompok seperti ini dalam suatu Negara. Hukum kemanusiaan internasional berlaku sejak permulaan konflik bersenjata tersebut dan terus berlaku setelah permusuhan berakhir hingga tercapainya perdamaian; atau, dalam kasus terjadinya konflik internal, hingga dicapai penyelesaian damai. Hingga saat seperti itu, hukum kemanusiaan internasional terus berlaku di seluruh wilayah Negara-negara yang bertikai atau,

dalam kasus terjadinya konflik internal, berlaku di seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan suatu pihak, tanpa memandang apakah pertempuran benar-benar terjadi atau tidak di wilayah-wilayah tersebut.²¹¹

142. Antara April dan Agustus 1974, kekerasan sporadis kecil-kecilan di Timor-Leste belum cukup untuk memicu penerapan hukum internasional. Sepanjang Agustus – September 1975, permusuhan antara Fretilin, dan UDT telah melampaui ambang kekacauan dan ketegangan kecil, dan telah lebih terorganisasi daripada sekadar kerusakan atau tindak kekerasan sporadis. Komisi yakin bahwa sejak 11 Agustus, ketika UDT melancarkan upaya aksi bersenjata, kedua partai dan kekuatan bersenjata yang berada di bawah kendali mereka terlibat dalam konfrontasi terbuka. Sepanjang September – November 1975, berbagai kelompok bersenjata di bawah kendali pasukan keamanan Indonesia memasuki wilayah Timor-Leste dan berhadapan dengan pasukan bersenjata di bawah kendali Fretilin hingga menjelang terjadinya invasi besar-besaran pada 7 Desember 1975. Situasi konflik bersenjata internasional dimulai ketika kelompok-kelompok bersenjata ini melintasi perbatasan, dan berlanjut setidaknya sampai akhir periode mandat Komisi, yakni 25 Oktober 1999. Meskipun kekuatan utama pasukan keamanan Indonesia dan milisi telah meninggalkan wilayah Timor-Leste pada saat itu, konflik bersenjata terus berlanjut antara kelompok-kelompok milisi di bawah kendali Indonesia dan pasukan penjaga perdamaian internasional setelah administrasi UNTAET mulai bekerja di wilayah ini pada 25 Oktober 1999.²¹²

Status konflik di Timor-Leste: konflik bersenjata internasional atau internal?

Kesimpulan:

1. Sepanjang periode mulai sekitar 11 Agustus 1975 hingga sekitar 1 Oktober 1975, hukum-hukum yang berkaitan dengan konflik bersenjata internal berlaku di Timor-Leste.
2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan konflik bersenjata internasional berlaku mulai sekitar 1 Oktober 1975 hingga 25 Oktober 1999.

Alasan:

143. Suatu konflik bersenjata internal atau non-internasional terjadi apabila suatu konflik bersenjata terjadi di dalam wilayah satu negara, tanpa keterlibatan negara lain.²¹³

144. Suatu konflik bersenjata internasional terjadi apabila:

- konflik terjadi antara dua negara atau lebih; atau
- konflik bersenjata internal terjadi di dalam satu negara, dan negara kedua ikut campur dalam konflik tersebut dengan pasukannya; atau

- konflik bersenjata internal terjadi di dalam satu negara, dan beberapa peserta dalam konflik itu, seperti kelompok-kelompok milisi, pada kenyataannya bertindak mewakili negara kedua.²¹⁴

145. Menurut teori hukum kemanusiaan internasional, bilamana suatu konflik bersenjata terjadi, hal itu adalah suatu konflik bersenjata internasional atau konflik bersenjata non-internasional (internal). Tidak ada kategori ketiga. Namun pada praktiknya terkadang lebih sulit untuk menentukan kategori konflik.

146. Dalam kasus Timor-Leste, ‘perang saudara’ antara Fretilin dan UDT merupakan konflik bersenjata internal, yang terjadi di dalam wilayah satu negara (Portugal). Meskipun Indonesia mulai turut campur dalam masalah Timor-Leste ketika wilayah ini masih di bawah kekuasaan Portugal, dengan mendukung para anggota Apodeti dan bahkan memberikan pelatihan militer dan persenjataan kepada para anggotanya,²¹⁵ hal ini tidak dapat menjadikan konflik tersebut bersifat ‘internasional’ kecuali jika Indonesia menjalankan ‘kontrol efektif’ terhadap aksi-aksi Apodeti,[†] atau setidaknya memiliki ‘kontrol menyeluruh’ atas Apodeti.[†] Komisi dengan demikian berpandangan bahwa ‘perang saudara’ tersebut berstatus konflik bersenjata internal.

147. Walaupun demikian, sejak pertengahan September 1975, dan mungkin lebih awal lagi, serangan-serangan lintas-batas dilancarkan oleh pasukan Indonesia, yang memegang kendali (dan karenanya memegang kontrol efektif dan menyeluruh) atas kelompok-kelompok Timor-Leste yang dikenal sebagai Partisan. Serangan-serangan lintas-batas ini kurang lebih terjadi pada akhir periode paling tegang dari ‘perang saudara’. Serangan-serangan awal disusul oleh invasi besar-besaran oleh Indonesia pada 7 Desember 1975.

148. Sifat konflik yang terjadi di Timor-Leste berbeda dengan kebanyakan konflik bersenjata internasional yang secara jelas melibatkan pasukan dari setidaknya dua negara. Pasukan yang melawan serangan pasukan Indonesia tidak berada di bawah komando dan kendali tentara Portugal (Portugal mengundurkan diri ke Ataúro). Pasukan ini termasuk para serdadu lokal Portugal dan tentara cadangan (*segunda linha*) yang bertindak secara independen, para anggota Falintil, dan milisi-milisi bentukan Fretilin. Sepanjang pendudukan tersebut, pasukan Indonesia berperang bukan melawan tentara Portugal tapi melawan pasukan bersenjata Falintil dan resistansi terorganisasi melawan pendudukan.

149. Komisi memandang bahwa konflik yang terjadi di Timor-Leste berstatus sebagai konflik bersenjata internasional sejak Oktober 1975 karena alasan-alasan berikut:

* *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v United States of America)* (1986) ICJ Reports 4 hal. 65. ICJ menyatakan bahwa pasokan senjata dan pelatihan tidak cukup tanpa adanya bukti tentang kontrol yang lebih efektif oleh negara: lihat hal. 64.

† *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Judgment, 15 Juli 1999 paragraf 120. ICTY dalam keputusan ini menolak uji ‘kontrol efektif’ yang dipakai ICJ di kasus *Nicaragua*. Perbedaan pendapat tetap berlanjut mengenai uji mana yang layak.

1. Telah terjadi konflik bersenjata yang cukup untuk memicu pemberlakuan hukum kemanusiaan internasional. Konflik ini jelas bukan merupakan konflik internal, karena bukan terjadi di dalam wilayah satu negara tanpa keterlibatan negara lain. Meskipun berbeda dengan situasi yang lebih umum yang melibatkan pasukan bersenjata dari dua negara berdaulat, pasukan bersenjata dari satu negara tersebut (Indonesia) bertempur di dalam wilayah negara lain (Portugal).
2. Invasi Indonesia merupakan campurtangan negara asing ke dalam konflik bersenjata internal yang tengah berlangsung, yang menjadikan konflik tersebut bersifat ‘internasional’.²¹⁶
3. Konvensi Jenewa 1949 (yang, selain Pasal Umum 3, mengatur konflik-konflik bersenjata internasional) berlaku atas “semua kasus pendudukan sebagian atau pun keseluruhan terhadap wilayah dari Pihak yang Terikat Perjanjian, bahkan jika pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.”²¹⁷ Karena Portugal merupakan negara peserta Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi-konvensi ini berlaku, atas dasar ini, terhadap bagian mana pun dari Timor-Leste yang diduduki oleh Indonesia (lihat bagian Lampiran ini yang menjelaskan tentang hukum pada pendudukan yang kejam).

Perjanjian-perjanjian yang relevan

150. Hukum kemanusiaan internasional, seperti bidang-bidang lain dari hukum internasional, sebagian besar terdiri atas berbagai perjanjian dan peraturan hukum kebiasaan internasional.’ Hukum kebiasaan yang berlaku dalam situasi-situasi konflik bersenjata disebut sebagai ‘hukum dan kebiasaan perang.’ Sementara perjanjian hanya mengikat negara-negara peserta perjanjian tersebut, hukum kebiasaan mengikat semua negara.

151. Mandat Komisi mendefinisikan ‘hukum kemanusiaan internasional’ mencakup:

- Keempat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949;
- Kedua Protokol Tambahan Konvensi Jenewa, yakni 12 Agustus 1949, dan yang terkait Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan non-Internasional (8 Juni 1977);
- Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Peralatan Konvensional Tertentu yang Dianggap Merusak Secara Luas atau Memiliki Dampak yang Tidak Pandang Bulu (10 Oktober 1980); dan
- Hukum dan kebiasaan perang.²¹⁸

.....
 * Yang meliputi, di antaranya, isi Regulasi Den Haag 1907: lihat *Advisory Opinion on the Treat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257-258 (mengutip keputusan Nuremberg IMT); *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Palestinian Occupied Territories* (2004) ICJ paragraf 89.

152. Berbagai ketentuan yang tercakup dalam sumber-sumber ini relevan dengan mandat Komisi untuk menguji pelanggaran terhadap berbagai *standar* yang diakui oleh masyarakat internasional yang terkait dengan perilaku perang, tanpa memandang apakah pada waktu mereka melakukan aksinya, ketentuan itu secara hukum mengikat pihak tertentu.

153. Namun, juga berguna untuk mempertimbangkan ketentuan mana yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut secara hukum. Ini mencakup berbagai kewajiban setiap pihak terhadap perjanjian dan ketentuan-ketentuan dalam hukum kebiasaan internasional yang dikenal sebagai 'hukum dan kebiasaan perang'.

Kewajiban-kewajiban perjanjian Indonesia

154. Sejak awal periode mandat, Indonesia merupakan negara peserta dari berbagai perjanjian hukum kemanusiaan berikut:

- Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (Indonesia menjadi peserta pada 30 September 1958);
- Konvensi Den Haag untuk Perlindungan Warisan Budaya dalam Situasi Konflik Bersenjata tertanggal 14 Mei 1954 (Indonesia menjadi peserta pada 10 Januari 1967);
- Protokol Pertama Konvensi Den Haag 1954 untuk Perlindungan atas Warisan Budaya dalam Situasi Konflik Bersenjata tertanggal 14 Mei 1954 (Indonesia menjadi peserta pada 26 Juli 1967); dan
- Protokol Jenewa untuk Pelarangan Penggunaan Gas PENCEKIK, BERACUN, atau yang Lainnya dan Peperangan tertanggal 17 Juni 1925 (Indonesia menjadi peserta pada 21 Januari 1971).

155. Indonesia juga menjadi negara peserta berbagai konvensi berikut sepanjang periode mandat:

- Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun, dan tentang Pemusnahan Senjata Tersebut tertanggal 10 April 1972 (Indonesia menjadi peserta pada 19 Februari 1992); dan
- Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan PERSENJATAAN Konvensional Tertentu yang Dianggap Dapat Merusak secara Luas atau Memiliki Dampak yang Tanpa Pandang Bulu (tertanggal 10 Oktober 1980) (Indonesia menjadi peserta pada 12 November 1998).

Kewajiban-kewajiban perjanjian Portugal:

156. Pada awal periode mandat, Portugal merupakan peserta perjanjian-perjanjian relevan berikut:

- Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (Portugal menjadi negara peserta pada 14 Maret 1961); dan
- Protokol Jenewa untuk Pelarangan Penggunaan Gas PENCEKIK, BERACUN, atau yang Lainnya, dan Peperangan, tertanggal 17 Juni 1925 (Portugal menjadi peserta pada 1 Juli 1930).

157. Selama periode mandat, Portugal menjadi peserta sejumlah perjanjian hukum kemanusiaan internasional lain, termasuk:

- Protokol Tambahan Pertama pada Konvensi Jenewa, tertanggal 8 Juni 1977 (Portugal menjadi negara peserta pada 27 Mei 1992)
- Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun, dan tentang Pemusnahan Senjata Tersebut, tertanggal 10 April 1972 (Portugal menjadi peserta pada 15 Mei 1975)
- Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Persenjataan Konvensional Tertentu yang Dianggap Dapat Merusak secara Luas (CCW), tertanggal 10 Oktober 1980 (Portugal menjadi peserta pada 4 April 1997)
- Protokol I CCW tentang Fragmen yang tidak dapat dideteksi (Portugal menjadi negara peserta pada 4 April 1997)
- Protokol II CCW tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Ranjau, Perangkap, dan Alat-alat lainnya (Portugal menjadi negara peserta pada 4 April 1997)
- Protokol III CCW tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Pembakar (Portugal menjadi negara peserta pada 4 April 1997)
- Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Kimia, dan tentang Pemusnahannya, tertanggal 13 Januari 1993 (Portugal menjadi peserta pada 10 September 1996)
- Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penyimpanan, Produksi, dan Pengiriman Ranjau Anti-Personil, dan Pemusnahannya, tertanggal 18 September 1997 (Portugal menjadi peserta pada 19 Februari 1975)
- Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, tertanggal 9 Desember 1948 (Portugal menjadi peserta pada 9 Februari 1999)

158. Meskipun demikian, karena Portugal bukan merupakan pihak yang terlibat dalam sebagian besar durasi konflik itu—kalau tidak dalam sepanjang konflik—dan mengingat Indonesia bukan merupakan peserta sebagian besar konvensi tersebut di atas, maka konvensi itu hanya memiliki relevansi yang kecil terhadap konflik ini.

Kewajiban negara dan kelompok bersenjata

Konflik bersenjata internasional: Invasi dan pendudukan Indonesia

159. Konvensi Jenewa 1949 berlaku dalam “semua kasus pendudukan total atau sebagian terhadap wilayah dari Pihak yang Terikat Perjanjian, bahkan jika pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.”

160. Konvensi tersebut dengan demikian berlaku dalam konflik bersenjata internasional yang melibatkan pasukan Indonesia dalam wilayah hukum Portugal, sejak permulaan konflik bersenjata internasional tersebut dan selama masa pendudukan Indonesia.*

161. Selain itu, rangkaian lengkap hukum dan kebiasaan perang berlaku dalam konflik tersebut.

162. Beberapa prinsip utama yang tercantum dalam sumber-sumber ini adalah sebagai berikut:

1. Serangan terhadap penduduk dan objek sipil dilarang

163. Salah satu aturan fundamental dalam konflik bersenjata internasional adalah prinsip pembedaan. Aturan ini menyatakan bahwa harus ada pembedaan antara penduduk dan objek-objek sipil di satu sisi, dengan berbagai pihak yang bertempur (petempur) dan sasaran militer di sisi lain. Pihak-pihak yang terlibat konflik hanya boleh menyerang petempur dan sasaran-sasaran militer lawan. Mahkamah Internasional menyebut aturan ini sebagai prinsip dasar utama dalam hukum kemanusiaan internasional.²¹⁹

164. Prinsip ini mencakup sejumlah aturan yang lebih khusus:

165. Serangan tidak boleh dilancarkan langsung terhadap penduduk sipil, objek sipil, atau kota atau gedung yang tidak dipertahankan.²²⁰ Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan dengan tujuan mengintimidasi atau menyorok penduduk sipil atau menyandera penduduk sipil.²²¹ Serangan terhadap objek budaya, tempat ibadah, atau objek yang penting untuk kelangsungan hidup penduduk sipil (seperti tempat-tempat yang digunakan untuk produksi makanan) dilarang.²²² Bahkan jika satu pihak yang terlibat dalam konflik melanggar aturan ini, pihak yang lain tidak boleh membalas dengan menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran.²²³ Penghukuman kolektif terhadap penduduk sipil dilarang; artinya, jika seseorang dicurigai melakukan tindak kriminal atau bertempur untuk pihak lawan dalam suatu konflik, pihak lawan tidak boleh menghukum teman, keluarga, atau komunitas orang itu.²²⁴

* Pasal 2 yang umum tertuang dalam Konvensi-Konvensi Jenewa menyatakan bahwa konvensi-konvensi berlaku dalam “semua kasus pendudukan total atau sebagian dalam wilayah dari Pihak yang Terikat Perjanjian, meskipun pendudukan tersebut tidak menemui resistansi bersenjata.” Portugal, yang merupakan penguasa administratif Timor-Leste, merupakan peserta Konvensi Jenewa selama periode mandat.

166. Menggunakan kelaparan penduduk sipil sebagai alat peperangan dilarang, sebagaimana halnya penghancuran atau pemindahan benda yang penting untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti makanan, tanaman pangan, ternak, instalasi air minum, atau alat produksi pangan.²²⁵ Pihak yang terlibat dalam konflik harus mengizinkan masuknya bantuan secara bebas, termasuk pasokan obat-obatan serta makanan dan pakaian untuk anak-anak dan ibu hamil.²²⁶

167. Serangan tidak boleh dilancarkan dengan menggunakan metode atau persenjataan yang tidak mungkin dapat membedakan antara sasaran sipil dan militer.²²⁷

168. Korban sipil dan kerusakan terhadap objek sipil akibat serangan terhadap sebuah sasaran militer dibolehkan hanya sepanjang tidak berlebihan dalam hal kepentingan serangan tersebut dari sisi militer.²²⁸ Serangan harus dilakukan dengan cara yang akan meminimalkan jatuhnya korban sipil dan kerusakan terhadap objek-objek sipil.²²⁹ Sejauh mungkin, peringatan dini harus diberikan kepada penduduk sipil akan datangnya serangan yang bisa membahayakan penduduk sipil.²³⁰

169. Hukum kebiasaan juga melarang “pemalsuan identitas”. Ini berarti bahwa petempur dilarang memalsukan status sipil (atau status orang lain yang dilindungi, seperti petempur yang terluka) untuk melancarkan serangan.²³¹

170. Protokol Jenewa I, mendefinisikan penduduk sipil dan objek-objek sipil sebagai berikut:

171. Orang sipil mencakup semua orang di dalam wilayah terkait kecuali para anggota:

- angkatan bersenjata, termasuk milisi dan unit relawan yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata;
- milisi atau gerakan resistansi; dan
- penduduk dalam sebuah wilayah yang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan invasi²³²

172. Jika tidak jelas apakah seseorang adalah penduduk sipil atau bukan, orang tersebut harus diperlakukan sebagai seorang sipil.²³³ Kehadiran beberapa individu yang bukan penduduk sipil di antara penduduk sipil tidak mengubah status sipil penduduk tersebut.²³⁴ Hal ini berarti bahwa meskipun di dalam suatu kota ada beberapa petempur, kota tersebut tidak boleh dijadikan sasaran militer.

173. Semua objek dan gedung kecuali ‘sasaran militer’ dikategorikan sebagai sipil, dan karena itu dilindungi.²³⁵ Sasaran militer adalah objek yang memberikan kontribusi efektif untuk aksi militer, dan perusakan atau perebutan objek tersebut memberikan keuntungan militer.²³⁶

* Meskipun perjanjian ini sendiri tidak berlaku dalam konflik di Timor-Leste karena Indonesia tidak menandatangani, ketentuan yang berkaitan dengan prinsip perbedaan dikatakan mencerminkan hukum kebiasaan: lihat misalnya Christopher Greenwood, “The Customary Law Status of the 1977 Geneva Protocols”, dalam Astrid J.M. Delissen dan Gerrard J. Tanja (editor) *Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1991, hal.109.

174. Jika gerilyawan turut serta dalam suatu konflik, mereka harus membedakan diri dari orang sipil. Menurut ketentuan hukum dan kebiasaan perang, dan Konvensi Jenewa Ketiga 1949, para pejuang seperti itu harus:

- menjadi bagian dari organisasi yang dikomandoi oleh seseorang yang bertanggung jawab atas anak buahnya;
- mengenakan tanda pembeda tertentu yang dapat dikenali dari jauh atau membedakan mereka dari penduduk sipil;†
- membawa senjata terang-terangan; dan
- secara umum melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.†

175. Standar yang lebih longgar berlaku untuk orang-orang yang mengangkat senjata secara spontan melawan tentara invasi tanpa waktu yang cukup untuk membentuk unit resmi yang terorganisasi. Mereka hanya diwajibkan untuk membawa senjata terang-terangan dan secara umum mematuhi hukum dan kebiasaan perang.²³⁷

176. Pihak yang tidak mematuhi persyaratan ini saat terlibat dalam pertempuran tidak berhak diberi status Tawanan Perang jika tertangkap,²³⁸ dan kehilangan status sipilnya sebagai akibat dari keterlibatannya, menjadikan mereka sasaran yang sah menurut hukum. Terkadang orang seperti ini disebut ‘petempur tak sah’ atau ‘tidak memiliki hak’. Mereka dapat diadili dan dihukum atas keterlibatannya dalam pertempuran. Namun, penting untuk diketahui, meskipun orang sipil tidak diizinkan untuk terlibat dalam pertempuran tanpa mematuhi persyaratan ini, mereka selalu diizinkan bertindak untuk membela diri.

177. Komisi berpandangan bahwa, pada umumnya, anggota Falintil cukup patuh dengan ketentuan di atas. Falintil memiliki struktur komando dan disiplin yang relatif ketat dan ditaati, membawa senjata secara terang-terangan, dan secara umum melaksanakan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Sejak permulaan konflik, para anggota Falintil mengenakan seragam tentara Portugal. Pada 1980, kebanyakan seragam tersebut menjadi usang, dan dalam beberapa kesempatan diganti dengan pakaian seragam militer tak resmi. Meskipun demikian, perpaduan antaraencana, seragam, serta aspek lain yang sangat dapat dibedakan,

.....
* Tujuan ketentuan dalam Pasal 1 Regulasi Den Haag dan Pasal 4A(2) Konvensi Jenewa III ialah agar petempur memakai tanda pengenal yang bisa dilihat dari jauh untuk memungkinkan musuh membedakan anggotanya (yang merupakan sasaran militer sah) dari penduduk sipil (yang bukan sasaran militer sah). Karena alasan ini, mungkin menurut hukum kebiasaan hal ini kemudian dituangkan ke dalam ketentuan yang lebih longgar dalam Pasal 43(3) Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa 1977 bahwa anggota kelompok harus membedakan diri dari penduduk sipil dengan cara tertentu. Mungkin ketentuan yang lebih longgar ini mencerminkan kebiasaan yang ada pada 1977 atau menjadi kebiasaan setelah tahun itu: lihat Christopher Greenwood, “Customary Law Status of the 1977 Geneva Protocols”, dalam Astrid J.M. Delissen dan Gerard J. Tanja (editor), *Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead*, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991, hal.107.

† Pasal 1 Regulasi Den Haag 1907 dan Pasal 4A(2) Konvensi Jenewa III. Meski persyaratannya yang lebih ringan tertuang dalam Artikel 44(3) Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa, perjanjian itu tidak berlaku dalam konflik di Timor-Leste dan dalam hal ini tidak mencerminkan hukum kebiasaan.

seperti misalnya para anggota Falintil menerapkan suatu kebijakan yang seragam dan eksklusif untuk memanjangkan rambut, membuat mereka mudah dibedakan dari jarak jauh..²³⁹

2. Perlakuan buruk terhadap petempur musuh

178. Menurut hukum perang, aturan-aturan khusus berlaku terhadap para petempur yang telah jatuh ke tangan musuh.

179. Kebanyakan petempur yang berada di tangan musuh berhak atas status Tawanan Perang. Petempur di sini mencakup:

- para anggota angkatan bersenjata, termasuk milisi yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata;
- orang yang mendampingi angkatan bersenjata sebagai pendukung atau dalam peran logistik;
- para anggota milisi atau gerakan resistansi yang telah memenuhi syarat untuk membedakan diri dari orang sipil (termasuk dengan mengenakan seragam yang membedakan dan terang-terangan membawa senjata), dan
- penduduk suatu wilayah yang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan invasi, tanpa punya waktu untuk mengorganisasi diri ke dalam struktur militer, tetapi yang terang-terangan membawa senjata dan mematuhi hukum dan kebiasaan perang.*

180. Jika tidak jelas apakah seseorang berhak atas status Tawanan Perang, dia harus diperlakukan sebagai seorang Tawanan Perang sampai pengadilan yang kompeten menentukan statusnya.²⁴⁰ Para tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi.²⁴¹ Mereka tidak boleh disiksa, dibunuh, atau dijadikan sasaran intimidasi atau penghinaan.²⁴² Mereka harus diberi makanan, air, dan perawatan medis apa pun yang diperlukan.²⁴³ Mereka harus dijauhkan dari daerah yang rawan serangan selama kegiatan militer.²⁴⁴

181. Para petempur yang jatuh ke tangan musuh tapi tidak berhak atas status Tawanan Perang, misalnya para pejuang perlawanan yang tidak mematuhi persyaratan untuk membedakan diri dari orang-orang sipil, masih berhak atas standar perlakuan tertentu. Menurut Konvensi Jenewa IV, orang yang berada di wilayah pendudukan yang dicurigai bertindak bermusuhan dengan penguasa pendudukan, harus diperlakukan dengan manusiawi dan berhak memperoleh pengadilan yang adil.²⁴⁵ Bagaimanapun, para petempur yang tidak sah tetap berhak atas perlakuan manusiawi menurut hukum

* Artikel 4 Konvensi Jenewa III; Artikel 44(1), (3) dan (4) Protokol Jenewa I. (Ini termasuk petempur yang sakit atau terluka: Artikel 14 Konvensi Jenewa I).

internasional umum⁷ dan atas perlindungan hukum hak asasi manusia yang melarang pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang, dan yang menjamin hak atas pengadilan yang adil (lihat bagian Lampiran ini tentang Pembunuhan di Luar Hukum [paragraf 78 – 82], Penghilangan [paragraf 83 – 85], Penahanan Sewenang-wenang [paragraf 89 – 94], Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat [paragraf 98 – 104], dan Pengadilan yang tidak adil [paragraf 105 – 111]).

3. Cara-cara perang yang tidak sah

182. Menurut hukum konflik bersenjata, persenjataan dan teknik-teknik ('cara-cara perang') yang boleh digunakan untuk menimbulkan kerugian terhadap pasukan lawan dibatasi.²⁴⁶ Dua prinsip umum berlaku:

1. Dilarang menggunakan cara-cara perang yang dapat mengakibatkan luka atau penderitaan yang berlebihan atau tidak perlu;²⁴⁷
2. Dilarang menggunakan cara perang yang tidak memungkinkan si penyerang memisahkan sasaran militer dengan orang sipil ('cara yang tidak pandang bulu'),²⁴⁸ Larangan ini mencakup taktik seperti meracuni sumber air dan upaya membuat penduduk kelaparan.²⁴⁹

4. Perekrutan paksa ke dalam kegiatan militer

183. Menurut hukum dan kebiasaan perang, dilarang untuk memaksa warga negara musuh untuk berpartisipasi dalam operasi perang yang ditujukan kepada negaranya sendiri.²⁵⁰ Konvensi Jenewa IV juga melarang penguasa pendudukan memaksa orang sipil untuk berdinasi dalam angkatan bersenjata atau pasukan binaan mereka.²⁵¹ Larangan ini juga mencakup tekanan atau propaganda yang ditujukan untuk mendorong keikutsertaan dalam dinas militer.²⁵²

5. Kewajiban penguasa pendudukan

184. Penting dicatat bahwa penguasa pendudukan tidak memperoleh kedaulatan atas wilayah yang diduduki. Sebaliknya, pendudukan harus merupakan kondisi sementara, dan penguasa pendudukan memiliki kewajiban tertentu terhadap penduduk lokal. Kewajiban ini merupakan tambahan atas berbagai kewajiban yang telah dijelaskan di atas mengenai permusuhan. Beberapa dari aturan yang paling penting dan relevan adalah:

.....
* Lebih khususnya, dengan memberlakukan Klausula Martens (yang tertuang dalam Konvensi Den Haag IV 1907 dan sejumlah konvensi lain), termasuk 'prinsip kemanusiaan': Lihat *Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-sixth Session*, 2 Mei - 22 Juli 1994, GAOR A/49/10, hal. 317; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257 dan 259, dan *The Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen* (Pendapat Berbeda Hakim Shahabuddeen) hal.406-408.

- Penduduk sipil berhak atas penghormatan terhadap dirinya sebagai pribadi, atas kehormatan, hak-hak keluarga, keyakinan beragama, adat dan kepemilikan, dan atas perlakuan manusiawi pada umumnya;²⁵³
- Penguasa pendudukan tidak boleh menyebabkan penderitaan fisik terhadap penduduk sipil;²⁵⁴
- Penguasa pendudukan harus memastikan bahwa penduduk menerima makanan, air, dan perawatan medis yang mencukupi, termasuk dengan mengimpor sumberdaya atau menerima bantuan jika pasokan lokal tidak mencukupi;²⁵⁵
- Penguasa pendudukan harus melindungi anak-anak dengan memastikan bahwa institusi untuk perawatan dan pendidikan mereka berjalan, dan dengan menahan diri agar tidak merekrut mereka dalam dinasny.²⁵⁶

185. Meskipun penguasa pendudukan diizinkan,²⁵⁷ bahkan diwajibkan,²⁵⁸ untuk memulihkan ketertiban umum, cara yang dapat digunakan untuk melakukan hal ini tidaklah tanpa batas. Penguasa pendudukan tidak boleh:

- mewajibkan penduduk di wilayah pendudukan untuk bersumpah setia pada penguasa pendudukan²⁵⁹
- menghalangi orang untuk mendapatkan hak atas suatu peradilan yang adil²⁶⁰
- melakukan pemindahan atau deportasi paksa baik secara individu maupun massal terhadap penduduk lokal atau memindahkan warganya sendiri ke dalam wilayah pendudukan,²⁶¹ atau
- membatalkan undang-undang dan lembaga hukum yang ada dalam wilayah pendudukan, kecuali bila diperlukan untuk mempertahankan pemerintahan dan keamanan;²⁶² atau menyelenggarakan peradilan pidana di luar wilayah pendudukan²⁶³

186. Penguasa pendudukan dapat memaksa penduduk sipil untuk bekerja (dengan upah yang layak), tetapi hanya bila diperlukan untuk kebutuhan tentara pendudukan atau untuk memastikan berfungsinya fasilitas umum atau penyediaan makanan, papan, dan layanan medis.²⁶⁴ Namun penguasa pendudukan tidak boleh:

- menyuruh penduduk sipil untuk berdinasi dalam pasukan bersenjata atau pasukan binaan penguasa pendudukan, atau menjadikan mereka sasaran tekanan atau propaganda sehingga mendorong mereka untuk mendaftar²⁶⁵
- memaksa anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk bekerja,²⁶⁶ atau
- memaksa penduduk sipil untuk memberi informasi mengenai pasukan resistansi atau cara perlawanan mereka²⁶⁷

187. Penguasa pendudukan dapat menggunakan sumberdaya dalam wilayah pendudukannya, tetapi hanya sampai batas yang diperlukan untuk menutupi biaya pendudukan. Penguasa pendudukan tidak boleh menggunakan sumberdaya lokal untuk memperkaya penduduknya sendiri atau membiayai operasi militer pada umumnya.²⁶⁸

188. Penguasa pendudukan dilarang menyita hak milik pribadi,* kecuali untuk kebutuhan tentara pendudukan apabila pengambilalihan ini sebanding dengan sumberdaya di negara tersebut dan mendapat imbalan sebagai gantinya.²⁶⁹

Apakah Timor-Leste merupakan wilayah pendudukan?

Suatu wilayah dianggap diduduki saat wilayah ini benar-benar berada di bawah kekuasaan tentara invasi.²⁷⁰ Hal ini dapat terjadi jika:

- penguasa pendudukan berada dalam posisi untuk mengganti otoritas wilayah pendudukan yang sudah tidak mampu berfungsi dengan layak melalui otoritasnya sendiri;
- pasukan musuh telah dikalahkan atau ditarik mundur, meskipun perlawanan lokal masih berlanjut;
- penguasa pendudukan memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat otoritasnya terasa;
- pemerintahan sementara telah dibentuk di wilayah tersebut;
- penguasa pendudukan telah mengeluarkan instruksi kepada penduduk sipil dan meminta kepatuhan penduduk.²⁷¹

Kekuasaan Indonesia atas wilayah Timor-Leste meningkat secara bertahap setelah invasi pada 1975. Komisi menilai bahwa setidaknya sejak Desember 1978 sampai September 1999, tanda-tanda ini telah terjadi di Timor-Leste, dan bahwa Indonesia telah cukup berkuasa atas wilayah ini sehingga bisa dianggap sebagai kekuatan pendudukan. Meskipun resistansi berlanjut, hal itu tidaklah cukup untuk meniadakan status pendudukan tersebut.

* Pasal 46 Regulasi Den Haag; membandingkannya dengan bangunan umum milik negara, yang bisa dipakai oleh tentara pendudukan.

Konflik bersenjata internal:

Perang Saudara Agustus – September 1975

189. Sumber-sumber utama hukum kemanusiaan yang berlaku selama berlangsungnya konflik bersenjata internal adalah:

- Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa 1949, dan
- Bagian-bagian dalam hukum dan kebiasaan perang.

190. Pasal Umum 3 mewajibkan pihak yang bertikai untuk memberikan perlakuan yang manusiawi kepada orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata atau sedang tidak mampu bertempur (*hors de combat*) karena sakit, luka, penahanan, atau sebab lain. Dalam kaitannya dengan orang-orang tersebut, dilarang untuk melakukan tindakan berikut:

- kekerasan, khususnya pembunuhan, mutilasi, perlakuan yang kejam, dan penyiksaan;
- penyanderaan;
- penghinaan harga diri seseorang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat; dan
- pemutusan hukuman atau pelaksanaan eksekusi tanpa pengadilan yang adil.

191. Prinsip-prinsip umum lainnya telah menjadi bagian dari hukum dan kebiasaan perang, dan berlaku selama terjadinya konflik bersenjata internal. Banyak dari aturan ini ditujukan untuk melindungi penduduk sipil:*

- Serangan tidak boleh dilancarkan terhadap penduduk sipil;²⁷²
- Dalam melaksanakan operasi militer, semua tindakan pencegahan yang memungkinkan harus diambil untuk melindungi penduduk sipil;²⁷³
- Dilarang menyerang permukiman penduduk sipil atau bangunan-bangunan lain, atau menyerang tempat atau daerah perlindungan sipil seperti rumah sakit;²⁷⁴
- Dilarang menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran pemindahan paksa atau tindakan pembalasan (tindak pembalasan terhadap pelanggaran hukum kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan musuh);²⁷⁵
- Harus selalu ada pembedaan antara penduduk sipil dan orang-orang yang terlibat dalam konflik ('petempur').²⁷⁶ Ini berarti bahwa petempur sendiri harus membedakan tampilan mereka dari orang-orang sipil, agar memungkinkan bagi petempur musuh untuk dapat membatasi serangannya

* lihat Resolusi Sidang Umum PBB 2444 (XXIII), 19 Desember 1968 dan Resolusi Sidang Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, keduanya diakui sebagai deklarator hukum kebiasaan oleh ICTY dalam *Prosecutor v Tadic, Appeals Chamber Decision on Jurisdiction* (Keputusan Pengadilan Banding tentang Yurisdiksi), paragraf 110-112; dan lihat secara lebih umum *Prosecutor v Tadic, Appeals Chamber Decision on Jurisdiction* (Keputusan Pengadilan Banding tentang Yurisdiksi), paragraf 100-119.

pada sasaran petempur dan militer. 'Pemalsuan Identitas' juga dilarang.'

192. Aturan fundamental hukum dan kebiasaan perang lain yang berlaku selama terjadinya konflik bersenjata internal adalah aturan yang membatasi cara dan persenjataan yang boleh digunakan.²⁷⁷ Aturan dasar yang mengatur cara perang yang diperbolehkan adalah sama dengan aturan-aturan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional.²⁷⁸ Prinsip-prinsip ini melarang metode dan persenjataan yang:

- Mengakibatkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tak perlu,²⁷⁹ atau
- Yang, karena sifatnya, tidak dapat membedakan antara sasaran sipil dan militer ("cara-cara yang tidak pandang bulu").²⁸⁰

Kewajiban individu (tanggung jawab pidana perorangan)

193. Mandat Komisi secara khusus mencakup 'tindak kejahatan' yang dilakukan di Timor-Leste selama periode yang relevan.

194. Hukum kebiasaan internasional melarang para individu untuk melakukan kejahatan berikut ini:

Genosida

195. Genosida terjadi bila seorang melakukan salah satu dari tindakan terlarang berikut ini terhadap suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, dengan maksud khusus untuk menghancurkan kelompok tersebut seluruhnya atau sebagian:

1. membunuh anggota kelompok tersebut;
2. menyebabkan luka fisik atau mental terhadap anggota kelompok itu;
3. menciptakan kondisi hidup tertentu terhadap suatu kelompok dengan tujuan untuk menghancurkan kelompok itu seluruhnya atau sebagian;
4. menerapkan berbagai tindakan untuk mencegah kelahiran;
5. memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lainnya.²⁸¹

Kejahatan terhadap kemanusiaan

196. Kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi jika salah satu dari tindakan yang dilarang berikut ini dilakukan sebagai bagian dari penyerangan yang luas atau sistematis terhadap penduduk sipil:

.....
* *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, *Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction* (Keputusan Pengadilan banding tentang Mosi Pengacara untuk Banding tentang Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 125. Lihat bagian mengenai hukum internasional: kewajiban negara dan kelompok bersenjata, paragraf 159 - 188.

1. pembunuhan
2. pembasmian (termasuk dengan tidak memberi makanan²⁸²)
3. perbudakan
4. deportasi atau pemindahan paksa penduduk
5. kerja paksa
6. pemenjaraan
7. penyiksaan
8. pemerkosaan
9. penindasan atas dasar politik, ras, atau agama
10. tindakan tak manusiawi lainnya²⁸³

Agresi

197. Kejahatan agresi pada awalnya dikatakan terjadi ketika seseorang merencanakan, mempersiapkan, memulai, atau menjalankan perang agresi atau perang yang melanggar perjanjian, kesepakatan, atau jaminan internasional, atau turut serta dalam rencana umum untuk melakukan tindakan tersebut.²⁸⁴

198. Namun, belakangan ini komunitas internasional tidak bisa mencapai kesepakatan mengenai definisi dari kejahatan ini.²⁸⁵

Kejahatan perang

199. Dua kategori kejahatan perang berlaku dalam konteks konflik bersenjata internasional. Yang pertama disebut sebagai 'pelanggaran berat' terhadap Konvensi Jenewa. Suatu 'pelanggaran berat' terjadi bila salah satu dari tindakan berikut dilakukan terhadap orang-orang yang rentan, khususnya yang terdampar, sakit, atau terluka, tawanan perang, dan penduduk sipil:

1. Pembunuhan disengaja
2. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis
3. Secara sengaja menyebabkan penderitaan atau luka badan atau sakit yang berat
4. Perusakan yang luas, dan perampasan harta benda yang tidak dapat dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan semena-mena
5. Memaksa seorang tawanan perang atau penduduk sipil untuk menjadi anggota angkatan bersenjata kekuatan musuh
6. Secara sengaja merampas hak tawanan perang atau penduduk sipil atas pengadilan yang adil dan reguler
7. Deportasi atau pemindahan yang tidak sah atau penyekapan tidak sah seorang penduduk sipil

8. Menyandera orang sipil²⁸⁶

200. Kategori kedua mencakup pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan perang termasuk, antara lain, sebagai berikut:

1. Pembunuhan, perlakuan buruk, atau pengusiran penduduk sipil di wilayah yang diduduki
2. Pembunuhan atau perlakuan buruk terhadap tawanan perang
3. Penjarahan harta benda milik pribadi dan umum
4. Perusakan kota dan desa secara sembarangan, atau penghancuran yang tidak bisa dibenarkan oleh keperluan perang²⁸⁷
5. Penggunaan senjata beracun atau senjata yang dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan yang tidak perlu
6. Penyerangan atau pengeboman kota, desa, permukiman, atau gedung yang tidak dipertahankan
7. Penyitaan, penghancuran, atau perusakan terhadap institusi yang ditujukan untuk kegiatan agama, amal, dan pendidikan, seni budaya dan ilmu, monumen bersejarah, dan karya seni dan ilmiah²⁸⁸
8. Secara sengaja melancarkan serangan kepada penduduk sipil dan objek sipil²⁸⁹
9. Menyandera orang²⁹⁰
10. Pemeriksaan²⁹¹
11. Penyiksaan (baik yang melibatkan pejabat publik atau murni orang awam)²⁹²
12. Membunuh atau melukai petempur yang sudah menyerah
13. Pemindahan oleh Penguasa Penduduk sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan penduduk wilayah yang diduduki
14. Memaksa warga negara musuh untuk ambil bagian dalam operasi-operasi perang yang ditujukan kepada negaranya sendiri
15. Menggunakan keberadaan penduduk sipil dan orang-orang lainnya yang dilindungi untuk menjadikan wilayah-wilayah kebal dari operasi militer
16. Menggunakan senjata atau cara-cara perang yang mengakibatkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, atau yang pada hakikatnya tidak membeda-bedakan sasaran
17. Dengan sengaja menggunakan pelaparan penduduk sipil sebagai cara perang dengan tidak memberi mereka hal-hal penting untuk bertahan hidup, termasuk sengaja menghalang-halangi pasokan bantuan*

201. Dalam konflik bersenjata internal, kejahatan perang hanya terdiri atas pelanggaran terberat terhadap Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa atau terhadap hukum

.....
* Paragraf (12) sampai (17) adalah contoh dari Pasal 8 Statuta ICC yang diyakini Komisi mencerminkan kejahatan perang menurut hukum kebiasaan.

dan kebiasaan perang.²⁹³ Pelanggaran berat Pasal Umum 3 mencakup tindakan-tindakan berikut bila dilakukan terhadap orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjatanya atau yang sakit, terluka, atau dalam penahanan:

1. Kekerasan terhadap hidup atau pribadi, khususnya segala jenis pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyiksaan
2. Melakukan serangan terhadap martabat seseorang, khususnya perlakuan yang menghina dan merendahkan
3. Menyandera orang, dan
4. Menjatuhkan hukuman dan menjalankan eksekusi tanpa adanya keputusan sebelumnya yang dibuat oleh pengadilan reguler, yang memberikan segala jaminan hukum yang sudah umum diakui sebagai syarat yang harus ada²⁹⁴

202. Pelanggaran-pelanggaran lain terhadap hukum dan kebiasaan perang yang merupakan kejahatan perang dalam suatu konflik bersenjata internal mencakup:

1. Melancarkan serangan terhadap penduduk sipil
2. Melakukan perkosaan atau pelanggaran seksual lainnya^{*}

Tanggung jawab komando

203. Menurut hukum internasional tidak hanya orang yang secara langsung melakukan kejahatanlah yang bertanggung jawab, tetapi juga atasan orang tersebut, khususnya di militer atau di pemerintahan. Seorang atasan akan bertanggung jawab langsung jika kejahatan yang dilakukan bawahannya adalah atas perintahnya. Selain itu, seseorang yang berada dalam posisi sebagai atasan (baik secara hukum maupun *de facto*), dan yang memiliki kendali efektif atas para bawahannya,²⁹⁵ akan memiliki tanggung jawab komando jika kejahatan dilakukan oleh seorang bawahan, dan atasan mengetahui atau seharusnya tahu tentang kejahatan tersebut dan tidak melakukan tindakan apa pun untuk mencegah atau menghukumnya.²⁹⁶

‘Tindak Pidana’: Hukum domestik Portugal dan Indonesia

Pendahuluan

204. Mandat Komisi mencakup referensi terhadap ‘tindak pidana’ yang terjadi di Timor-Leste selama periode terkait. Istilah ini tidak didefinisikan dalam regulasi UNTAET yang terkait dengan Komisi. Komisi menilai bahwa hal ini dimaksud untuk mencakup pelanggaran hukum pidana domestik dan internasional yang berlaku di wilayah Timor-Leste dalam masa yang relevan.

* Lihat misalnya Artikel 8(2)(e)(i) dan (vi) yang dinilai Komisi mencerminkan hukum kebiasaan internasional.

Hukum mana yang berlaku di Timor-Leste?

Tidak diragukan lagi bahwa pada awal periode mandat Komisi, hukum yang berlaku di Timor-Leste adalah hukum Portugis. Hukum ini tetap berlaku setidaknya sampai invasi Indonesia.

Lebih sulit untuk mengatakan hukum mana yang berlaku pada masa pendudukan Indonesia. Walaupun Indonesia dilarang menurut hukum internasional untuk menerapkan hukumnya di wilayah Timor-Leste yang didudukinya, jelas bahwa pada kenyataannya hukum Indonesialah yang diterapkan dan ditegakkan.

Pengadilan Banding Timor-Leste berpendirian bahwa karena aneksasi Indonesia telah melanggar hukum internasional, hukum Indonesia tidak pernah berlaku di Timor-Leste dan hukum Portugis terus berlaku.²⁹⁷

Sebaliknya, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat berpendapat bahwa Pengadilan Banding telah salah dalam penerapan hukum Portugis, dan bahwa hukum Indonesia pada kenyataannya berlaku.²⁹⁸ Parlemen Timor-Leste juga telah mengesahkan undang-undang yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku sebelum 25 Oktober 1999, dan kemudian berlaku sejak itu, adalah undang-undang Indonesia.²⁹⁹

Kekuasaan pendudukan harus memberlakukan seluruh hukum pidana yang ada dalam wilayah pendudukan, satu-satunya pengecualian ialah hukum yang mengancam keamanan kekuasaan pendudukan atau menghambat penerapan Konvensi Jenewa.³⁰⁰ Dengan demikian, penerapan secara besar-besaran sistem hukum dan undang-undang domestik dari kekuasaan pendudukan adalah hal yang dilarang.³⁰¹ Bila ini terjadi, maka kekuasaan pendudukan melanggar kewajibannya menurut hukum kemanusiaan. Namun, tidak jelas apakah hukum yang baru atau diimpor menjadi tidak sah di dalam wilayah pendudukan.

Karena itu, mungkin menurut hukum internasional hukum Portugis tetap berlaku dilihat dari segi hukum, namun dalam kenyataannya hukum Indonesialah yang berlaku secara *de facto*. Karena alasan ini, Komisi menilai bahwa kedua kodifikasi hukum relevan bagi mandatnya berkaitan dengan periode pendudukan Indonesia.

Hukum Portugal

205. Pada 25 April 1974, awal periode mandat CAVR, hukum Portugal adalah hukum domestik yang berlaku di Timor-Leste. Hukum Portugallah yang mengatur tindakan-tindakan berbagai pihak yang berpartisipasi dalam kekerasan menjelang dan selama perang saudara 1975.

206. Hukum Pidana Portugal sebagaimana berlaku pada 1975 mencakup larangan terhadap perilaku sebagai berikut:

207. Kejahatan terhadap kebebasan pribadi, termasuk:

- menahan orang yang bebas³⁰²
- menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu³⁰³
- menahan, menangkap, memenjarakan, atau menyekap seseorang secara tidak sah,³⁰⁴ khususnya bila kekerasan atau ancaman pembunuhan, penyiksaan, atau penyerangan digunakan,³⁰⁵ atau ketika seseorang disandera³⁰⁶
- menggunakan kekerasan terhadap orang yang ditahan secara sah³⁰⁷

208. Kejahatan terhadap seseorang, termasuk:

- pembunuhan dan percobaan pembunuhan, khususnya jika tindakan tersebut direncanakan atau disertai dengan penyiksaan atau perlakuan kejam³⁰⁸
- penyerangan, khususnya yang mengakibatkan sakit, luka, penderitaan mental, atau kematian³⁰⁹
- menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata api atau senjata berpeluru³¹⁰

209. Dalam kasus yang melibatkan provokasi atau bela diri, pembelaan-diri dapat mengurangi atau membatalkan tanggung jawab atas tindak pidana semacam ini.³¹¹

210. Kejahatan yang melibatkan kerusakan harta benda, termasuk:

- penjarahan rumah³¹²
- pembakaran³¹³
- perusakan sebagian atau seluruh bangunan milik orang lain atau negara³¹⁴
- merusak atau menghancurkan fasilitas umum³¹⁵
- merusak tanaman pertanian atau ternak³¹⁶
- merusak harta benda dalam kerusuhan³¹⁷

Hukum Indonesia

211. Hukum Indonesia mulai berlaku di Timor-Leste setelah wilayah ini dianeksasi sebagai provinsi Indonesia ke-27 melalui Undang-Undang No. 7/76, tertanggal 17 Juli 1976.³¹⁸ Walaupun aneksasi Indonesia terhadap Timor-Leste melanggar hukum internasional, Komisi menilai bahwa hukum Indonesia relevan dalam hal apa pun

karena hukum inilah yang mengatur tindak-tanduk orang-orang Indonesia di Timor-Leste, yang dalam banyak kasus melanggar tidak hanya hukum internasional, tetapi juga hukum Indonesia itu sendiri. Selain itu, sah atau tidak, hukum Indonesia secara *de facto* digunakan untuk mengatur tindakan orang Timor-Leste.

212. Komisi tidak memasukkan dalam penyelidikannya tindakan yang secara teknis melanggar hukum Indonesia, jika hukum tersebut merupakan pelanggaran standar hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, dan hak atas penentuan nasib sendiri. Hukum Indonesia mengandung banyak ketentuan yang melarang kegiatan politik yang dianggap mengancam kewenangan negara. Ketentuan ini terdapat misalnya dalam Undang-undang tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan-kegiatan Subversif,³¹⁹ Undang-undang mengenai Kegiatan Politik,³²⁰ serta beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

213. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil dan pejabat, termasuk angkatan bersenjata. Jenis-jenis perilaku berikut ini merupakan tindak pidana menurut KUHP:

214. Kejahatan terhadap keselamatan umum seseorang, termasuk:

- dengan sengaja membakar, menimbulkan ledakan, merusak jaringan listrik, atau merusak atau menghancurkan bangunan, khususnya jika hal ini mengancam harta benda atau nyawa atau mengakibatkan kematian;³²¹
- meracuni sumber air umum.³²²

215. Kejahatan seksual dan yang terkait, termasuk:

- pemerkosaan;⁷
- bersetubuh dengan perempuan di bawah usia 15 tahun;³²³
- menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan atau membiarkan tindakan yang tidak senonoh, atau melakukan tindakan tidak senonoh terhadap seseorang yang tidak sadar atau tidak berdaya, atau perempuan di bawah usia 15 tahun;³²⁴
- perdagangan perempuan atau anak laki-laki.³²⁵

216. Kejahatan terhadap kebebasan pribadi, termasuk:

- berpartisipasi dalam perbudakan;³²⁶
- penculikan;³²⁷
- menculik seseorang di bawah umur, khususnya bila dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan;³²⁸
- merampas kebebasan seseorang, khususnya jika terjadi luka fisik yang berat atau kematian.³²⁹

.....
* Pasal 285 KUHP (Pemukosaan didefinisikan hanya mencakup hubungan seksual dengan seorang perempuan di luar pernikahan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Pasal 286 KUHP melakukan hubungan badan di luar nikah dengan seorang perempuan yang tidak sadar atau tidak berdaya juga dilarang).

217. Kejahatan terhadap hidup dan pribadi seseorang, termasuk:

- pembantaian;³³⁰
- pembunuhan;³³¹
- perlakuan buruk, khususnya jika hal ini menyebabkan luka fisik yang berat atau kematian, atau jika direncanakan;³³²
- secara sengaja menimbulkan luka fisik yang berat terhadap orang lain ('penganiayaan berat'), khususnya bila direncanakan.³³³

218. Kejahatan terhadap harta benda, termasuk:

- pencurian, khususnya jika dilakukan selama kebakaran, ledakan, atau keadaan kacau yang disebabkan oleh perang, atau bila disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan³³⁴
- secara sengaja menghancurkan atau merusak harta benda milik orang lain, jaringan listrik, atau air bersih, atau bangunan³³⁵

219. Kejahatan terhadap ketertiban umum dan kejahatan serupa, termasuk:

- menghalangi seseorang memberikan suara secara bebas dalam suatu pemilihan umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;³³⁶
- menghalangi pertemuan publik yang sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;³³⁷
- menghalangi pertemuan keagamaan publik yang sah atau upacara penguburan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;³³⁸
- menguburkan atau menyembunyikan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematiannya.³³⁹

220. KUHP menentukan bahwa jika seorang pejabat (termasuk anggota angkatan bersenjata³⁴⁰) melakukan kejahatan dengan menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau fasilitas yang dimilikinya karena jabatan yang dipegangnya, hukuman untuk pelanggaran tersebut akan ditingkatkan sebesar sepertiga.³⁴¹ Selain itu, tindak pidana tertentu oleh pejabat dilarang, termasuk:

- penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat untuk memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau untuk membiarkan sesuatu;³⁴²
- penggunaan unsur paksaan oleh seorang pejabat untuk mendapatkan pengakuan atau pernyataan dalam suatu kasus pidana.³⁴³

Hukum militer Indonesia

221. Selain ketentuan-ketentuan pidana umum dalam KUHP, anggota militer Indonesia diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan undang-undang lain khusus untuk militer.³⁴⁴

222. Walaupun Indonesia adalah negara peserta Konvensi Jenewa 1949, Indonesia belum memasukkan substansi dari konvensi-konvensi tersebut ke dalam hukum militernya. Ini berarti bahwa kejahatan perang yang tertuang dalam Konvensi

Jenewa bukan merupakan tindak pidana dalam hukum Indonesia. Demikian juga, selama periode mandat CAVR hukum Indonesia tidak mengakui kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, atau penyiksaan (walaupun hal-hal tersebut belakangan ini telah dimasukkan.*

Catatan Akhir

1. Regulasi 10/2001 Bagian 3.1 (b)
2. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (a) (ii)
3. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (a)(i)
4. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (a)(iii)
5. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (a)(iv)
6. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (a)(v)
7. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (a)(vi)
8. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (c)
9. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (d)
10. Regulasi 10/2001 Bagian 21
11. Regulasi 10/2001 Bagian 3.1 (e)
12. Regulasi 10/2001 Bagian 3.1 (g)
13. Regulasi 10/2001 Bagian 3.1 (h)
14. Regulasi 10/2001 Bagian 3.1 (f)
15. Regulasi 10/2001 Bagian 3.1 (i)
16. Regulasi 10/2001 Bagian 3.3
17. Regulasi 10/2001 Bagian 13.2
18. Regulasi 10/2001 Bagian 1 (j)
19. Laporan Pertemuan Para Pelapor Khusus/Wakil Ahli dan Ketua Kelompok Kerja Prosedur Khusus Komisi Hak Asasi Manusia dan Program Layanan Saran, Komisi Hak Asasi Manusia PBB, E/CN.4/1997/3, 30 September 1996, paragraf 46; Laporan analitis Sekretaris Jenderal tentang Standar Minimum Humaniter yang sesuai dengan Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1997/21, E/CN.4/1998/87, 5 Januari 1998, paragraf 59-61.
20. Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, Vol. 1, Bab 4, paragraf 77-81.
21. Regulasi 10/2001 Bagian 1 (c)
22. Regulasi 10/2001 Bagian 1 (d)
23. Regulasi 10/2001 Bagian 14
24. Regulasi 10/2001 Bagian 20.1 dan 39
25. Regulasi 10/2001 Bagian 45
26. Regulasi 10/2001 Bagian 44.2
27. Regulasi 10/2001 Bagian 44.2
28. Regulasi 10/2001 Bagian 13.1 (a)(i), (iii) dan 13.1 (c)
29. *International Commission of Inquiry on Timor-Leste to the Secretary General*, UN Document A/54/726 – S/2000/59, 31 Januari 2000
30. Regulasi 10/2001 Bagian 3(c), 13(1)
31. Regulasi 10/2001 Bagian 3(l)(d)
32. Regulasi 10/2001 Bagian 3(l)(e)
33. Pasal 25 Piagam PBB.

.....
* sebagai bagian dari Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan *Ad Hoc* HAM

34. Resolusi Dewan Keamanan 384 (1975), 22 Desember 1975, paragraf 2; Resolusi Dewan Keamanan 389 (1976), 22 April 1976, paragraf 2.
35. Pasal 2(4) Piagam PBB.
36. *Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v United States of America)* (1986), Laporan ICJ 4, hal. 100.
37. Pasal 51 dan 42, Piagam PBB.
38. Christine Gray, *International Law and the Use of Force*, Oxford, Oxford University Press, 2000, hal. 52.
39. Pasal 73 Piagam PBB.
40. Pasal 73(a) Piagam PBB.
41. Peraturan 10/2001 Bagian 22.1
42. Peraturan 10/2001 Bagian 23
43. Peraturan 10/2001 Bagian 24
44. Peraturan 10/2001 Bagian 25, 26 dan 27
45. Peraturan 10/2001 Bagian 27.7
46. Peraturan 10/2001 Bagian 27.8
47. Peraturan 10/2001 Bagian 28
48. Peraturan 10/2001 Bagian 32
49. Peraturan 10/2001 Skedul 1, paragraf 1
50. Peraturan 10/2001 Bagian 22.2
51. Pasal 25 Piagam PBB
52. *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) Laporan ICJ 226 hal. 254-255.
53. Resolusi Dewan Keamanan 384, 22 Desember 1975; Resolusi Dewan Keamanan 389, 22 April 1976; Resolusi Sidang Umum 3485 (XXX), 12 Desember 1975; Resolusi Sidang Umum 36/50, 24 November 1981; Resolusi Sidang Umum 37/30, 23 November 1982.
54. *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, (2004) ICJ paragraf 87.
55. Peraturan 10/2001 Bagian 3 dan 1(e)
56. Peraturan 10/2001 Bagian 1(e)
57. *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, (2004) ICJ paragraf 102-106; lihat juga *Concluding Observations of the Human Rights Committee on Israel*, 18 Agustus 1998 (CCPR/C/79/Add.93 paragraf 10), dan 21 Agustus (2003CCPR/CO/78/ISR paragraf 11); dan *Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on Israel*, 23 Mei 2003, (E/C.12/1/Add.90 paragraf 15 dan 31).
58. *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, (2004) ICJ paragraf 107-113.
59. Yang paling penting dalam *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, GA Res 1514 (XV) 14 Desember 1960; *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations*, GA Res 2625 (XXV) 24 Oktober 1970; dan *Definition of Aggression*, GA Res 3314 (XXIX) 14 Desember 1974.
60. *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) ICJ paragraf 88 dan 155-156; *Case Concerning East Timor (Portugal v Australia)* (1995) Laporan ICJ 90 paragraf 29.
61. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 12, paragraf 1
62. Antonio Cassese, *Self-Determination of Peoples*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, hal. 90; *Yearbook of the International Law Commission* (1988) Vol II, bagian 2, hal.64; Lihat juga *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, (2004) ICJ, Pendapat Terpisah hakim Higgins paragraf 29-30.
63. GA Res 3485 (XXX) 12 Desember 1975; GA Res 31/53, 1 Desember 1976; GA Res 32/34, 28 November 1977; GA Res 33/39, 13 Desember 1978; GA Res 34/40, 21 November 1979; GA Res 35/27, 11 November 1980; GA Res 36/50, 24 November 1981; GA Res 37/30, 23 November 1982.
64. SC Res 384, 22 Desember 1975; SC Res 389, 22 April 1976.
65. Pasal 1(3) ICCPR dan Pasal 1(3) ICESCR

66. Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 12, paragraf 6
67. Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 12, paragraf 6
68. Lihat misalnya pendapat terpisah Hakim Higgins (paragraf 30) dan Hakim Kooijmans (paragraf 32) dalam *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) Laporan ICJ.
69. *Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory* (2004) Laporan ICJ, paragraf 88.
70. *Advisory Opinion on the Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South-West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)* (1971) Laporan ICJ 16 paragraf 119; Pendapat terpisah Hakim Separate opinion of Judge Weeramantry dalam *Case Concerning East Timor (Portugal v Australia)* (1995) Laporan ICJ 90, terutama paragraf 204; Pasal 41(2), ILC *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, International Law Commission, Commentaries on the Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, hal. 287-291 terutama hal. 290.
71. Komisi Hak Asasi Manusia *General Comment* 24, paragraf 8
72. Pasal 4(2) ICCPR; Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 6, paragraf 1
73. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 6, paragraf 7
74. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 6, paragraf 3
75. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 6, paragraf 2; Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 14, paragraf 2
76. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 6, paragraf 4
77. *Jegatheeswara Sarma v Sri Lanka* (2003) HRC Communication No. 950/2000 paragraf 9.3.
78. Lihat Pasal 1(2), Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, Resolusi Sidang Umum 47/133, tertanggal 18 Desember 1992
79. *Quinteros v. Uruguay* (1983) HRC Comm. No. 107/1981 paragraf 14; *Jegatheeswara Sarma v Sri Lanka* (2003) HRC Communication No. 950/2000 paragraf 9.5.
80. Kelompok Kerja PBB tentang Penghilangan Paksa atau Tidak Sukarela, *Fact Sheet* No. 6 (Rev. 2)
81. Pasal 13(1) UDHR dan Pasal 12(1) ICCPR
82. Pasal 12(3) ICCPR; HRC *General Comment* 27, paragraf 11.
83. Pasal 25(1) UDHR dan Pasal 11(1) ICESCR
84. Pasal 11(2) ICESCR
85. CESCR *General Comment* 12 paragraf 8
86. Pasal 2 ICESCR, CESCR *General Comment* No. 12, paragraf 14
87. Komisi Hak Sosial Ekonomi dan Budaya, *General Comment* 12, paragraf 14
88. Komisi Hak Sosial Ekonomi dan Budaya, *General Comment* 12, paragraf 19
89. Komisi Hak Sosial Ekonomi dan Budaya, *General Comment* 15, paragraf 3; Pasal 11(1) ICESCR
90. Pasal 25(1) UDHR; Pasal 11(1) ICESCR; CESCR *General Comment* 4
91. Pasal 3 UDHR, Pasal 6 ICCPR
92. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 6, paragraf 5
93. Lihat keputusan Pengadilan Eropa tentang Hak Asasi Manusia dalam *Engel v The Netherlands* (ECHR 1976 Applic No 5100/71) paragraf 58
94. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 24, paragraf 8
95. Lihat Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB *Fact Sheet* No. 26 tentang Working Group on Arbitrary Detention atau Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang; lihat juga misalnya Pendapat 2003 yang dirumuskan oleh Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang, E/CN.4/2004/3/Add.1.
96. *Van Alphen v The Netherlands* (HRC Comm. No. 305/1998, 23 Juli 1990).
97. Lihat misalnya keputusan Pengadilan Eropa tentang Hak Asasi Manusia dalam *Quinn v France* (1995) ECHR Applic No. 18580/91.
98. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 8 paragraf 2; Lihat juga *Jijon v Ecuador* (1992) HRC Comm. No. 227/88, saat keterlambatan lima hari dalam membawa tahanan di hadapan hakim dianggap melanggar Pasal 9(3).
99. Pasal 9(3) ICCPR.

100. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 8 paragraf 3.
101. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 8 paragraf 4.
102. Lihat Aturan Standar Minimum Perlakuan Tahanan; Ketentuan mengenai Prinsip Perlindungan Semua Orang dalam Penahanan atau Pemenjaraan Apa pun dan Prinsip Dasar Perlakuan Tahanan.
103. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 29, paragraf 13(a).
104. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 29, paragraf 13(a).
105. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 21, paragraf 3
106. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 20, paragraf 6; Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 7, paragraf 2; *El-Megreisi v Libyan Arab Jamahiriya* (1990) HRC Comm. No. 440/90, paragraf 5.4; *Mukong v Cameroon* (1994) HRC Comm. No. 458/91 paragraf 9.3-9.4.
107. *Mukong v Cameroon* (1994) HRC Comm. No. 458/91 paragraf 9.3-9.4.
108. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 24, paragraf 8; *Prosecutor v Anto Furundzija* (1998) Kasus ICTY No IT-95-17/1, Keputusan Pengadilan, 10 Desember 1998, paragraf 144-155
109. *Prosecutor v Anto Furundzija* (1998) Kasus ICTY No IT-95-17/1, Keputusan Pengadilan, 10 Desember 1998, paragraf 144-155.; Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 24, paragraf 10.
110. Pasal 2(1) CAT.
111. Pasal 16 CAT.
112. Pasal 2(2) CAT.
113. Pasal 4 CAT
114. Pasal 12 dan 13 CAT; Pasal 16 CAT.
115. Pasal 10 CAT; Pasal 11 CAT; Pasal 16 CAT
116. Pasal 15 CAT
117. *GRB v Sweden* (1998) CAT Comm No. 83/1997, paragraf 6.5.
118. *Elmi v Australia* (1999) HRC Communication No. 120/1998, paragraf 6.5.
119. *Prosecutor v Kunarac* (2002) ICTY Appeals Chamber, paragraf 146-147.
120. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 20 paragraf 4.
121. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 20 paragraf 2
122. *Mukong v Cameroon* (1994) HRC Comm. No. 458/91 paragraf 9.4.
123. *Concluding observations of the Committee against Torture on Israel, A/52/44, 9/5/97* paragraf 257; lihat juga *Ireland v UK* (1978) ECHR Applic No 5310/71, paragraf 96 and 167.
124. *Concluding observations of the Committee against Torture on Israel, A/52/44, 9/5/97*, paragraf 257.
125. *Concluding observations of the Committee against Torture on Israel, A/52/44, 9/5/97*, paragraf 257; lihat juga *Ireland v UK* (1978) ECHR Applic No 5310/71, paragraf 96 and 167.
126. *Concluding observations of the Committee against Torture on Israel, A/52/44, 9/5/97* paragraf 257.
127. Pasal 16 CAT.
128. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 20, paragraf 2.
129. Pasal 9(2) dan 14(3)(a) ICCPR
130. Pasal 9(3) ICCPR
131. Pasal 14(3)(b) ICCPR.
132. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 13, paragraf 9.
133. Pasal 14(3)(c) ICCPR.
134. Pasal 14(1) ICCPR.
135. *Campbell v Jamaica* (1993) HRC Communication No. 307/1988, paragraf 6.4.
136. *Campbell v Jamaica* (1993) HRC Communication No. 307/1988, paragraf 6.4.
137. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 20, paragraf 12; Pasal 15 CAT.
138. Pasal 14(1) ICCPR
139. *Van Meurs v The Netherlands* (1990) Comm No 215/1986, pada paragraf 6.2; lihat juga *Riepan v Austria* (2000) ECHR, Application no. 35115/97, paragraf 28-31.
140. Pasal 14(2) ICCPR.
141. Pasal 14(3)(d) ICCPR
142. Pasal 14(3)(e) ICCPR
143. Pasal 14(3)(f) ICCPR.

144. Pasal 14(3)(g) ICCPR.
145. *Berry v Jamaica* (1994) HRC Communication No. 330/1988, paragraf 11.7.
146. Pasal 14(5) ICCPR.
147. *Henry v Jamaica* (1991) HRC Communication No. 230/1987, paragraf 8.4; *Little v Jamaica* (1991) HRC Communication No. 283/1988, paragraf 8.5.
148. Pasal 15 ICCPR.
149. Pasal 19 UDHR; Pasal 19 ICCPR.
150. Pasal 20 UDHR; Pasal 21 dan 22 ICCPR.
151. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 10, paragraf 1.
152. Pasal 19(3) ICCPR; Pasal 21 ICCPR; Pasal 22(2) ICCPR; Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 10, paragraf 4; *Kim v Republic of Korea*, (1999) HRC Communication No. 574/1994, paragraf 12.2.
153. *Kim v Republic of Korea*, (1999) HRC Communication No. 574/1994, paragraf 12.5; **Park v Korea** (1998) HRC Communication No. 628/1995, paragraf 10.3.
154. *Park v Korea* (1998) HRC Communication No. 628/1995, paragraf 10.3.
155. *Prosecutor v Anto Furundzija*, ICTY Case No. IT-95-17/1, Trial Chamber Judgment, 10 Desember 1998, paragraf 170-171; 1995 Report of the UN Special Rapporteur on Torture, E/CN.4/1995/34 Paragraf 15-24; *Mejia v. Peru* (1996) Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 5/96; *Aydin v. Turkey* (1997) ECHR Applic No 23178/94 paragraf. 83 dan 86.
156. *Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, ICTY Case No IT-96-23 dan IT-96-23/1, Appeals Chamber Judgment, 12 Juni 2002, paragraf 150
157. *Prosecutor v Anto Furundzija*, ICTY Case No IT-95-17/1, Trial Chamber Judgment, 10 Desember 1998, paragraf 170.
158. Pasal 12 UDHR dan Pasal 17 ICCPR; lihat misalnya *Mejia v. Peru* (1996) Inter-American Commission on HR, Report No. 5/96.
159. Menurut Pasal 2 CEDAW; Pasal 2(1) ICCPR, Pasal 2(2) ICESCR; Lihat misalnya CEDAW *General Recommendations* 12 dan 19.
160. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment* 28, paragraf 8.
161. Pasal 4 UDHR, Pasal 8 ICCPR.
162. *Barcelona Traction, Light and Power Co Ltd (Belgium v Spain)* (1970) ICJ Reports 4 hal. 32.
163. Lihat *Summary record of the 1359th meeting*: Nepal, 21/10/94, CCPR/C/SR.1359 paragraf 41.
164. *Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, ICTY Case No IT-96-23 dan IT-96-23/1, Trial Chamber Judgment, 22 Februari 2001, paragraf 539; *Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, ICTY Case No IT-96-23 dan IT-96-23/1, Appeals Chamber Judgment, 12 Juni 2002, paragraf 124.
165. Pasal 6 CEDAW
166. Lihat juga Pasal 24 ICCPR
167. Pasal 3(1) CRC.
168. Pasal 6 CRC.
169. Pasal 37(a) CRC.
170. Pasal 37(b) CRC.
171. Pasal 24 CRC; Lihat juga ICESCR Pasal 12(2)(a).
172. Pasal 19 CRC
173. Pasal 34 CRC
174. Pasal 36 CRC.
175. Pasal 27 CRC.
176. Pasal 37 CRC; lihat juga ICCPR Pasal 6.
177. Pasal 38(2)-(3) CRC.
178. Pasal 38(3) CRC.
179. Pasal 32; lihat juga Pasal 10(3) ICESCR.
180. Pasal 9 CRC.
181. Pasal 11 dan 35 CRC.
182. Pasal 21 CRC.

183. Pasal 20 CRC.
184. Pasal 8 CRC.
185. Pasal 6 ICESCR dan Pasal 23 UDHR; lihat juga larangan kerja paksa dalam Pasal 8(3) ICCPR.
186. Pasal 7 ICESCR dan Pasal 23 UDHR
187. Pasal 7 ICESCR
188. Pasal 11 ICESCR dan Pasal 25(1) UDHR.
189. Pasal 12 ICESCR
190. Pasal 13 ICESCR, Pasal 26 UDHR, Pasal 28 CRC. Lihat juga Pasal 29 CRC.
191. Pasal 2(1) ICESCR
192. Komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, *General Comment 3*, paragraf 1-2.
193. Komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, *General Comment 3*, paragraf 10.
194. Komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, *General Comment 3*, paragraf 10.
195. Pasal 1(2) ICESCR, Pasal 1(2) ICCPR.
196. Pasal 23 ICCPR.
197. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment No. 19*, paragraf 5.
198. Pasal 16(e) CEDAW.
199. Komisi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, *General Comment 19*, paragraf 22 dan 24(m); lihat juga Komisi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, *General Recommendation 21*, paragraf 22.
200. Misalnya Pasal 4 ICCPR.
201. Pasal 4(2) ICCPR.
202. Pasal 4(2) ICCPR.
203. Pasal 4(2) ICCPR.
204. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment 29*, paragraf 15(a).
205. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment 29*, paragraf 16.
206. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment 29*, paragraf 16
207. Komisi Hak Asasi Manusia, *General Comment 29*, paragraf 14-5.
208. Regulasi 10/2001 Bagian 1(c).
209. Lihat Liesbeth Zegveld, *The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law*, Cambridge University Press, 2002, hal. 9-38.
210. *Prosecutor v Akayesu*, ICTR Trial Chamber, Case number ICTR-96-4-T, keputusan tanggal 2 September 1998, paragraf 601.
211. *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Mosi Pengacara untuk Proses Banding tentang Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 70.
212. Lihat, misalnya, kutipan tentang pertempuran yang berlanjut antara kelompok milisi dan Interfet dalam *Report of the Secretary-General on the United Nations Transitional Administration in Timor-Leste*, S/2000/53, 26 Januari 2000, paragraf 18; *Report of the Security Council Mission to Timor-Leste and Indonesia (9-17 November 2000)*, S/2000/1105, 21 November 2000, paragraf 9.
213. Lihat, misalnya Pasal 1(1) protokol Kedua Konvensi Jenewa 1977.
214. *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Mosi Pengacara untuk Proses Banding tentang Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 84.
215. Tomàs Gonçalves, Wawancara SCU, 8 Agustus 2000
216. *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Mosi Pengacara untuk Proses Banding tentang Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 85.
217. Pasal Umum 2, Konvensi Jenewa 1949.
218. Regulasi 10/2001 Bagian 1(d).
219. *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
220. Pasal 25 Regulasi Den Haag; Pasal 27 Konvensi Jenewa IV; Pasal 51(2) dan 57(1) dan (2)(a) Protokol Jenewa I; Pasal 52(1) Protokol Jenewa I.
221. Pasal 33-34 Konvensi Jenewa IV; Pasal 51(2) Protokol Jenewa I.

222. Pasal 53 dan 54(2) Protokol Jenewa I.
223. Pasal 33 Konvensi Jenewa IV; Pasal 51(6) dan 52(1) Protokol Jenewa
224. Pasal 33 Konvensi Jenewa IV.
225. Pasal 54 Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa yang mencerminkan hukum kebiasaan internasional.
226. Pasal 23 Konvensi Jenewa IV.
227. Pasal 51(4) dan (5) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
228. Pasal 51(5)(b) dan Pasal 57(2)(a)(iii) dan (b) Protokol Jenewa I.
229. Pasal 57(3) Protokol Jenewa I.
230. Pasal 26 Regulasi Den Haag; Pasal 57(2)(c) Protokol Jenewa I.
231. *Prosecutor v Tadic*, Appeals Chamber decision on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Yurisdiksi), paragraf 125.
232. Pasal 50(1) dan 43 Protokol Jenewa I dan Pasal 4A Konvensi Jenewa III.
233. Pasal 50(1) Protokol Jenewa I.
234. Pasal 50(3) Protokol Jenewa I.
235. Pasal 52(1) Protokol Jenewa I.
236. Pasal 52(2) Protokol Jenewa I.
237. Pasal 4A(6) Konvensi Jenewa III.
238. Pasal 4A Konvensi Jenewa III.
239. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, mantan asisten Kepala Staf Falintil, Dili 3 Mei 2005.
240. Pasal 5 Konvensi Jenewa III; Pasal 45(1) Protokol Jenewa I.
241. Pasal 4, Regulasi Den Haag, Pasal 13 Konvensi Jenewa III.
242. Pasal 13 dan Pasal 17 Konvensi Jenewa III.
243. Pasal 15, 26, 30 Konvensi Jenewa III.
244. Pasal 19 dan 23 Konvensi Jenewa III.
245. Pasal 5 Konvensi Jenewa IV.
246. Pasal 22 Regulasi Den Haag; Pasal 35(1) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal.256.
247. Deklarasi St Petersburg 1868; Pasal 23 Regulasi Den Haag; Pasal 35(2) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
248. Pasal 51(4) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
249. Lihat juga Pasal 54(1)-(2) Protokol Jenewa I.
250. Pasal 23 Regulasi Den Haag.
251. Pasal 51 Konvensi Jenewa IV.
252. Pasal 51 Konvensi Jenewa IV.
253. Pasal 46 Regulasi Den Haag, Pasal 27(1) dan 53 Konvensi Jenewa IV.
254. Pasal 32, Konvensi Jenewa IV.
255. Pasal 55, Konvensi Jenewa IV; lihat juga Pasal 56 Konvensi Jenewa IV tentang perawatan kesehatan dan Pasal 59-62 tentang penerimaan bantuan.
256. Pasal 50 Konvensi Jenewa IV.
257. Pasal 27 Konvensi Jenewa IV.
258. Pasal 43 Regulasi Den Haag.
259. Pasal 45 Regulasi Den Haag.
260. Pasal 65-75 Konvensi Jenewa IV; lihat juga Pasal 23(h) Regulasi Den Haag.
261. Pasal 49 Konvensi Jenewa IV.
262. Pasal 43 Regulasi Den Haag dan Pasal 64 Konvensi Jenewa IV.
263. Pasal 66 Konvensi Jenewa IV.
264. Pasal 51 Konvensi Jenewa IV.
265. Pasal 51 Konvensi Jenewa IV; lihat juga secara umum Pasal 23 Regulasi Den Haag.
266. Pasal 51 Konvensi Jenewa IV.

267. Pasal 44 Regulasi Den Haag.
268. *In re Krupp and Others* (1948) 15 Annual Digest 620 hal. 622-623, *NV De Bataafsche Petroleum Maatschappij and others v The War Damage Commission* (1956) 23 ILR 810 hal. 822.
269. Pasal 52 Regulasi den Haag 1907; lihat juga Pasal 55 Konvensi Jenewa IV.
270. Pasal 42 Regulasi den Haag 1907; *Prosecutor v Naletilic and Martinovic Trial Chamber Judgment*, 31 Maret 2003, paragraf 216.
271. *Prosecutor v Naletilic and Martinovic Trial Chamber Judgment*, 31 Maret 2003, paragraf 217
272. Resolusi Sidang Umum PBB 2444 (XXIII), 19 Desember 1968, paragraf 1(b) dan Resolusi Sidang Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf 4.
273. Resolusi Sidang Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf 3.
274. Resolusi Sidang Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf 5 dan 6.
275. Resolusi Sidang Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf 7.
276. Resolusi Sidang Umum PBB 2444 (XXIII), 19 Desember 1968, paragraf 1(c) dan Resolusi Sidang Umum PBB 2675 (XXV), 9 Desember 1970, paragraf 4.
277. Resolusi Sidang Umum PBB 2444 (XXIII), 19 Desember 1968, paragraf 1(a); *Prosecutor v Tadic*, Appeals Chamber decision on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan banding tentang Yurisdiksi), paragraf 119.
278. *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang Mosi Pengacara tentang Proses banding Yurisdiksi), 2 Oktober 1995, paragraf 119.
279. Lihat misalnya Pasal 23 Regulasi Den Haag 1907; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
280. Lihat misalnya *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports 226 hal. 257.
281. Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida 1948, Pasal 2
282. Lihat Pasal 7(2)(b) Statuta Roma ICC
283. Pasal 6(c) Piagam London untuk Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg, Pasal 5 Statuta ICTY, Pasal 3 Statuta ICTR, Pasal 7(1) Statuta Roma ICC
284. Piagam London tentang IMT Nuremberg
285. Giorgio Gaja, "The Long Journey towards Repressing Aggression" dalam Antonio Cassese dkk. (editor), *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2002, hal. 435-438; Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence* (Edisi Ketiga), Cambridge, Cambridge University Press, 2001 hal. 114-116.
286. Lihat Pasal 50 Konvensi Jenewa I; Pasal 51 Konvensi Jenewa II; Pasal 130 Konvensi Jenewa III; dan Pasal 147 Konvensi Jenewa IV
287. Paragraf (1)-(4) tertuang dalam Piagam London tentang IMT Nuremberg, Pasal 6(b)
288. Paragraf (5)-(7) tertuang dalam Statuta ICTY, Pasal 3.
289. *Prosecutor v Tihomir Blaskic*, ICTY Case No IT-95-14-T, Trial Chamber Judgment, 3 Maret 2000, paragraf 170, 180.
290. *Prosecutor v Tihomir Blaskic*, ICTY Case No IT-95-14-T, Trial Chamber Judgment, 3 March 2000, paragraf 187.
291. *Prosecutor v Anto Furundzija*, ICTY Case No IT-95-17/1-T, Trial Chamber Judgment, 10 Desember 1998, paragraf 168.
292. *Prosecutor v Dragoljub Kunurac and others*, ICTY Case No IT-96-23&23/1, Appeals Chamber Judgement, 12 Juni 2002, paragraf 148.
293. *Prosecutor v Dusko Tadic*, ICTY Case Number IT-94-1, Appeals Chamber Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 Oktober 1995, paragraf 134.
294. Pasal Umum 3, Konvensi Jenewa 1949.
295. Lihat *Prosecutor v Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic and Esad Landzo*, ICTY Case No IT-96-21, Appeals Chamber Judgment, 20 Februari 2001, paragraf 196-198.
296. Lihat contoh Pasal 7(3) Statuta ICTY; Pasal 6(3) Statuta ICTR; dan Pasal 28 Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional 1998.
297. *Armando dos Santos v The Prosecutor General*, Kasus No. 16/2001, 15 Juli 2003; *Agustinho da Costa v The Prosecutor General*, Kasus No. 07/2000, 18 Juli 2003.

298. *The Public Prosecutor v João Sarmento and Domingos Mendonça*, Kasus No. 18a/2001, hal.10-13.
299. Pasal 1 Undang-Undang 10/2003, 10 Desember 2003
300. Pasal 64 Konvensi Jenewa IV.
301. Myres S. McDougal dan Florentino P. Feliciano, *The International Law of War*, New Haven, New Haven Press, 1994, hal.760
302. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Pidana Portugis ("Penahanan").
303. Pasal 329 Kitab Undang-Undang Pidana Portugis ("Pemaksaan Secara Fisik").
304. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Pidana Portugis ("Penahanan Pribadi").
305. Pasal 331 Kitab Undang-Undang Pidana Portugis ("Perubahan Khusus dalam Kejahatan Penahanan Pribadi").
306. Pasal 332 Kitab Undang-Undang Pidana Portugis.
307. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Pidana Portugis ("Kekerasan terhadap tahanan sebagai Pribadi").
308. Pasal 349 ("Pembunuhan Sederhana yang Kejam"), Pasal 350 ("Percobaan Pembunuhan dan Pembunuhan yang Gagal"), dan Pasal 351 ("Pembunuhan Bersyarat").
309. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis Pasal 359 ("Tindak pidana yang disengaja"), Pasal 360 ("Tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan atau ketidakmampuan untuk bekerja"), Pasal 361 ("Tindak pidana yang mengakibatkan kehilangan kesadaran mental, tidak mampu secara permanen untuk bekerja, atau pun kematian"), dan Pasal 362 ("Tindak pidana yang mengakibatkan kematian dalam kondisi kecelakaan").
310. Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis ("Penggunaan dan Ancaman dengan Senjata Api atau Senjata Berpeluru")
311. Pasal 370-375, 377, 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis
312. Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis ("Pendobrakan Rumah Orang Asing").
313. Pasal 463-470 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis
314. Pasal 472-473 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis.
315. Pasal 474 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis.
316. Pasal 477, 479, dan 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis.
317. Pasal 478 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugis.
318. UU No.7 tahun 1976 Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (LN No.35/1976); PP No.19 of 1976 Tentang Pengukuhan Penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia (LN No. 39/1976), dikukuhkan pada 1978 dengan TAP MPR-RI No. VI/MPR/1978
319. Keputusan Presiden No. 11/PNPS/1963, yang pada 1969 dijadikan Undang-Undang No. 5/1969
320. Undang-Undang No. 5/1963, yang dijadikan Undang-Undang No. 5/1969.
321. Pasal 187, 191 bis, 191 ter, 200 KUHP.
322. Pasal 202 KUHP.
323. Pasal 187 KUHP.
324. Pasal 289 dan 290 KUHP.
325. Pasal 297 KHUP.
326. Pasal 324 KUHP
327. Pasal 328 KUHP.
328. Pasal 330 KUHP.
329. Pasal 333 KUHP.
330. Pasal 338 dan 339 KUHP.
331. Pasal 340 KUHP.
332. Pasal 351-353 KUHP.
333. Pasal 354 dan 355 KUHP.
334. Pasal 362, 363, dan 365 KUHP.
335. Pasal 406, 407, 408 dan 409 KUHP.
336. Pasal 148 KUHP
337. Pasal 173 KUHP
338. Pasal 175 KUHP.

339. Pasal 181 KUHP.
340. Pasal 92(3) KUHP
341. Pasal 52 KUHP.
342. Pasal 421 KUHP
343. Pasal 422 KUHP
344. Misalnya Undang-Undang No. 40/1947 tentang Hukum Disiplin Militer dan Undang-Undang No. 6/1950 tentang Prosedur Kriminal Sistem Peradilan Militer dan juga Undang-Undang No. 1/ Drt/1958.



Chega!

Bagian

3.

Sejarah Konflik

Bagian 3. Sejarah konflik

157 | Pendahuluan

159 | Penjajahan Portugis atas Timor-Leste

- 159 | Tinjauan
- 160 | Kedatangan Portugis
- 161 | Konsolidasi kekuasaan kolonial
- 162 | Pemerintahan Portugis dan resistansi rakyat Timor
- 164 | Timor Portugis pada abad ke-20
 - 164 | Perang Dunia Kedua
- 165 | Gerakan internasional untuk dekolonisasi dan posisi Portugal
- 166 | Rencana pembangunan Portugis dan berkembangnya sentimen anti-penjajah

167 | Perubahan di Portugal dan proses dekolonisasi

- 167 | Tinjauan
- 168 | MFA dan Revolusi Anyelir
 - 168 | Dekolonisasi yang cepat, kekacauan di Portugal
- 170 | Dampak Revolusi Anyelir di Timor Portugis
- 170 | Pembentukan partai-partai politik di Timor Portugis

172 | Suasana internasional dan kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis

- 172 | Tinjauan
- 173 | Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Portugis
- 174 | Indonesia dan masyarakat internasional
- 176 | Kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis

180 | Proses dekolonisasi dan partai-partai politik

- 180 | Tinjauan
- 180 | Permulaan kesadaran politik
- 181 | Susunan partai-partai politik
- 183 | Perkembangan dan ketegangan internal
 - 183 | Kompetisi antara UDT dan Fretilin
 - 183 | Pelatihan militer Apodeti di Timor Barat

- 183 | Partai-partai politik bersiap menghadapi konfrontasi bersenjata
 - 184 | Mahasiswa dari Portugal
 - 185 | ASDT menjadi Fretilin
 - 185 | Istilah 'Maubere'
- 186 | Fretilin dan ancaman komunisme
- 188 | Tidak adanya toleransi politik
- 189 | 'Misi mustahil' Lemos Pires
- 190 | Koalisi antara UDT dan Fretilin

192 | Keterlibatan Indonesia yang semakin besar di Timor Portugis: Destabilisasi dan diplomasi

- 192 | Tinjauan
- 192 | Operasi Komodo dan peningkatan operasi rahasia militer
- 193 | Diplomasi Indonesia
 - 193 | Pertemuan di Lisbon antara Portugal dan Indonesia, 14 - 15 Oktober 1974
 - 195 | Pertemuan di London antara Portugal dan Indonesia, 9 Maret 1975
 - 196 | Pertemuan antara Soeharto dan Whitlam, di Wonosobo, 6 September 1974, dan di Townsville, 4 April 1975
 - 198 | Pertemuan Makau, 26 - 28 Juni 1975
 - 199 | Pertemuan antara Presiden Soeharto dan Presiden Gerald Ford, 5 Juli 1975

200 | Gerakan Bersenjata 11 Agustus dan konflik bersenjata internal

- 200 | Tinjauan
- 201 | UDT melancarkan gerakan bersenjata 11 Agustus
- 203 | Kegagalan negosiasi: Konflik bersenjata internal
- 205 | UDT mundur ke perbatasan
- 206 | Tanggapan Portugal terhadap konflik internal
- 206 | Tanggapan Indonesia
 - 206 | Partai-partai politik Timor-Leste berada di bawah pengaruh Indonesia
 - 207 | Operasi Flamboyan: operasi Indonesia memasuki tahapan baru

208 | Timor Portugis di bawah administrasi Fretilin

- 208 | Tinjauan
- 208 | Fretilin mengisi kekosongan
- 209 | Tahanan dan kekerasan politik
 - 209 | Ekse Fretilin di akhir Agustus menjelang September
 - 210 | Penjara Fretilin dan Komisi Penyelidikan

- 211 | Memulihkan ketertiban
- 212 | Pemerintahan
- 214 | Balibó: Indonesia meningkatkan intensitas operasi militer

..... 216 | Deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin, dan tanggapan terhadapnya

- 216 | Tinjauan
- 216 | Latar belakang deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin
- 218 | Deklarasi kemerdekaan
- 221 | Reaksi atas deklarasi kemerdekaan
 - 221 | Deklarasi Balibó
 - 221 | Portugal
 - 222 | Indonesia
 - 222 | Tanggapan internasional yang lebih luas
- 223 | Invasi besar-besaran di ambang pintu

..... 224 | Invasi besar-besaran

- 224 | Tinjauan
- 224 | Keputusan Indonesia untuk menginvasi dan melakukan perang terbuka
- 226 | Dili mempersiapkan strategi pertahanan
- 226 | Berbagai persiapan militer Indonesia: Operasi Seroja
- 227 | Invasi Dili dan Baucau
 - 227 | Penyerangan
 - 228 | Kontrol informasi: Upaya menyembunyikan keterlibatan ABRI
 - 229 | Kekerasan besar-besaran terhadap penduduk sipil
 - 231 | Para pemimpin Fretilin menyingkir ke pedalaman
 - 231 | Pasukan invasi menduduki Baucau
 - 231 | Harga invasi besar-besaran
- 232 | Tanggapan PBB terhadap invasi besar-besaran

..... 233 | Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan dan upaya Indonesia untuk meresmikan integrasi

- 233 | Tinjauan
- 234 | ABRI melakukan konsolidasi; Indonesia mendirikan 'pemerintahan sementara'
- 235 | Fretilin mundur, pembantaian tahanan
- 235 | Pergerakan ABRI, awal 1976
- 236 | Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan
- 237 | Fretilin kembali menyusun kekuatan

- 238 | Indonesia meresmikan integrasi
- 240 | Operasi Seroja berlanjut – pesawat Bronco OV-10 buatan AS mulai digunakan
- 240 | Kebuntuan militer, akhir 1976

..... 241 | ‘Pengepungan dan penghancuran’: tahap akhir Operasi Seroja, 1977 - 1979

- 241 | Tinjauan
- 242 | Penduduk sipil di gunung-gunung
- 242 | Kapasitas ABRI terkuras dan kepercayaan diri awal Fretilin
- 243 | Amerika Serikat memimpin dalam mempersenjatai-ulang militer Indonesia
- 244 | Perpecahan internal Fretilin dan pembersihan berdarah
- 246 | ABRI mengintensifkan operasi militer: pengepungan dan penghancuran, Agustus 1977 - Agustus 1978
 - 246 | Penghancuran sumber pangan, Fretilin mundur ke gunung bersama penduduk sipil
 - 247 | Serangan di wilayah tengah
 - 248 | Operasi (atau Gerakan) Cahaya, dengan sasaran para pemimpin Fretilin
 - 249 | Operasi militer Indonesia di wilayah tengah dan timur, akhir 1978: Jatuhnya Matebian
- 250 | Penyerahan diri: Turun dari Matebian
 - 251 | Setelah Matebian: Serangan ABRI di wilayah tengah dan timur

..... 251 | Penyerahan diri, pemukiman kembali, dan kelaparan

- 251 | Tinjauan
- 252 | Penyerahan dan eksekusi tahanan
- 253 | Kamp-kamp penampungan sementara
- 254 | Kamp penahanan jangka panjang dan strategi keamanan ABRI
- 255 | Wilayah tertutup
- 256 | Bantuan ICRC dan CRS
- 257 | Ataúro sebagai pulau penjara
- 258 | Berbagai kamp penahanan ditutup

..... 259 | Operasi keamanan

- 259 | Tinjauan
- 260 | Situasi di Dili dan seluruh Timor-Leste, 1979 - 1980
- 261 | Pemberontakan pertama: Dili, Juni 1980

- 261 | 'Pagar Betis': Operasi Kikis
 - 262 | Mobilisasi massal penduduk sipil
 - 263 | Pembantaian Lacluta
- 264 | Konsekuensi operasi
 - 264 | Hasil militer
 - 264 | Berbagai konsekuensi kemanusiaan

..... 265 | Membangun kembali Resistansi

- 265 | Tinjauan
- 266 | Sejumlah anggota Fretilin yang bertahan setelah serangan 1978 - 1979
- 267 | Kembali menyusun kekuatan
- 269 | Konferensi Reorganisasi Nasional (Maret 1981)
- 270 | Pertumbuhan Resistansi
- 271 | Resistansi di bawah pimpinan Xanana Gusmão: Menuju persatuan nasional
- 272 | Gereja Katolik

..... 273 | Gencatan senjata 1983 dan masa sesudahnya

- 273 | Tinjauan
- 274 | Pemilu Indonesia di Timor-Leste: 1982
- 275 | Perubahan personel sipil dan militer Indonesia, dan berbagai aksi Resistansi
- 275 | Pendekatan baru militer Indonesia: Negosiasi
- 277 | Gencatan senjata
- 277 | Pengangkatan Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI: 1983
- 278 | Monsignor Costa Lopes dicopot
- 278 | Gencatan senjata dirongrong
- 280 | Berakhirnya gencatan senjata

..... 282 | Konsolidasi dan awal perubahan: 1984 - 1991

- 282 | Tinjauan
- 283 | Perkembangan Resistansi
- 284 | Represi dan pemenjaraan
- 285 | Kebangkitan gerakan pemuda klandestin
- 286 | Gereja Katolik
- 287 | Situasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa

- 288 | Kunjungan Paus Yohanes Paulus II
- 290 | Jakarta membuka Timor-Leste
- 291 | Perkembangan internasional menjelang akhir dasawarsa 1980-an
 - 291 | Perjanjian Celah Timor
 - 291 | Akhir Perang Dingin

..... 292 | Titik-balik

- 292 | Tinjauan
- 292 | Pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991
- 295 | Dampak internasional Santa Cruz
- 296 | Penangkapan Xanana Gusmão
- 297 | Jaringan klandestin pelajar
 - 297 | Klandestin di Timor-Leste dan kebangkitan kekuatan paramiliter
 - 297 | Gerakan mahasiswa di Indonesia
- 299 | Rencana damai CNRM dan inisiatif diplomatik
- 300 | Kasus pengadilan internasional: Portugal vs. Australia, 1991 - 1995
- 301 | Hadiah Nobel Perdamaian 1996
- 302 | Perserikatan Bangsa-Bangsa

..... 303 | Dari Reformasi ke pengumuman tentang Jajak Pendapat

- 303 | Tinjauan
- 304 | Jatuhnya Soeharto
- 306 | CNRT dan kampanye diplomatik
- 306 | Dampak Reformasi di Timor-Leste
- 307 | Munculnya para milisi
- 310 | Xanana Gusmão mengimbau toleransi
- 310 | Negosiasi tentang paket otonomi
- 312 | Peningkatan teror milisi
- 314 | Kesepakatan 5 Mei
- 315 | Pengaturan keamanan dalam Kesepakatan 5 Mei

..... 316 | Jajak Pendapat

- 316 | Tinjauan
- 317 | Penempatan UNAMET
- 317 | Komisi Pemilihan
- 318 | Pilihan

- 318 | Koordinasi pemerintah Indonesia untuk Jajak Pendapat
- 318 | Kehadiran masyarakat internasional di Timor-Leste
- 319 | Pemantau dari Timor-Leste dan Indonesia
- 319 | Pengamanan untuk Jajak Pendapat
- 321 | Kekerasan oleh TNI-Milisi: Juni - Juli
- 322 | Dare II
- 322 | Pendaftaran pemilih
- 323 | Kampanye
 - 323 | Kelompok prokemerdekaan
 - 324 | Kelompok aktif pro-otonomi
 - 325 | Pemerintahan sipil Indonesia di Timor-Leste
 - 326 | Periode kampanye resmi
- 326 | Situasi keamanan memburuk: Agustus
- 328 | Persiapan terakhir Jajak Pendapat
- 328 | Jajak Pendapat
- 329 | Penghitungan dan hasil

..... 330 | Indonesia meninggalkan Timor-Leste: Bumi hangus

- 330 | Tinjauan
- 332 | Tindak kekerasan sesudah pengumuman hasil pemungutan suara
- 333 | TNI resmi mengambil kendali
- 335 | Markas UNAMET
- 336 | Meningkatnya tekanan internasional
- 338 | Evakuasi penduduk secara paksa
- 339 | Interfet datang: TNI ditarik
- 340 | Pembentukan UNTAET: Resolusi Dewan Keamanan 1272, 25 Oktober 1999
- 341 | Pulang

Sejarah konflik

Pendahuluan

1. Bagian ini memberi konteks historis pada kejadian-kejadian yang tercakup dalam bab-bab pelanggaran Laporan ini. Bagian ini didasarkan pada sumber primer Komisi ini sendiri; dari pernyataan, wawancara, dan kesaksian yang diberikan pada audiensi publik; dari bukti dokumenter yang tersedia bagi Komisi; dan dari analisis sumber-sumber sekunder yang relevan. Pada umumnya bagian ini terbatas pada ulasan singkat atas berbagai kejadian penting, momen, dan titik balik dalam periode mandat komisi yang relevan terhadap konflik-konflik politik; upaya untuk menyelesaikan konflik ini; dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konflik-konflik ini. Dalam cakupan Laporan ini, tidak mungkin untuk memberikan penjelasan pasti mengenai berbagai persoalan kunci yang terus menjadi dugaan sejarah mengenai masa dan kejadian-kejadian tersebut. Bukan tugas Komisi ini untuk membuat penilaian pasti yang seperti itu. Bagian ini memang berupaya untuk mengidentifikasi apa saja persoalan-persoalan ini, dan Komisi mendorong penelitian, penulisan, serta analisis lebih lanjut terhadap berbagai aspek penting dalam sejarah Timor-Leste.

2. Analisis dan penulisan sejarah Timor-Leste ini merupakan langkah penting dalam pembangunan bangsa, dan cara hal ini dilakukan akan mencerminkan masyarakat seperti apa yang akan ditumbuhkan oleh negeri baru kita ini. Laporan Komisi didasarkan pada umumnya atas pernyataan dan wawancara yang diberikan oleh warga Timor biasa dari seluruh penjuru negeri, dan berupaya untuk menarik suara mereka ke dalam sebuah dialog berkelanjutan untuk membangun negeri kita yang baru ini. Laporan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi sejarah yang eksklusif, yang hanya merekam pandangan dan pencapaian para pemimpin nasional, atau dari salah satu pihak dalam percaturan politik. Laporan ini didasarkan pada gagasan bahwa perekaman dan analisis sejarah haruslah bersifat terbuka bagi informasi dan gagasan baru, dan bagi informasi

dan pandangan yang belum tentu populer secara politis. Sementara sejarah adalah sesuatu yang penting bagi pembangunan bangsa, versi sejarah simplistis yang ingin menyembunyikan segala kenyataan buruk atau menghilangkan kontribusi orang dari berbagai bidang kehidupan tidak akan dapat membangun bangsa yang kuat dan tangguh. Penulisan sejarah yang mengakui kompleksitas, yang memberi ruang bagi suara-suara yang sering terbungkam, dan membuka jalan bagi renungan terbuka dapat memberi sumbangan dalam pembangunan suatu bangsa di mana gagasan mengenai kekuatan didasarkan pada penghormatan orang lain, keberagaman, dan demokrasi yang didasarkan pada kesetaraan semua warga negaranya.

3. Penulisan sejarah Timor-Leste adalah penting sebagai dasar bagi hubungan kita dengan tetangga internasional kita, khususnya Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh sejarawan Indonesia, Asvi Warman Adam, kepada Komisi pada audiensi nasional tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional:

Ingatan kolektif kedua bangsa akan menentukan sifat serta kuat-lemahnya hubungan antara kedua bangsa itu. Hal ini akan tecermin dalam penulisan sejarah kedua bangsa ini.¹

4. Bagian ini dimulai dengan ulasan singkat tentang sejarah kolonial Timor-Leste di bawah kekuasaan Portugal. Bagian ini sengaja memberi penekanan pada periode menjelang konflik internal Agustus - September 1975, serta invasi Indonesia setelah itu. Ulasan ini membahas berbagai kejadian dan hubungan seputar proses dekolonisasi Timor Portugis, di dalam wilayah ini, di Indonesia, dan di dalam konteks regional dan geopolitik yang lebih luas. Hal ini penting bagi pemahaman akan penyebab konflik politik di Timor-Leste, tentang berbagai kesempatan yang hilang untuk menghindari perang dan mencari penyelesaian damai atas persoalan politik berdasarkan prinsip hukum internasional, dengan melibatkan aktor Timor, Indonesia, serta internasional.

5. Segmen-segmen berikutnya membahas kampanye militer besar-besaran oleh Indonesia pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an, serta upaya politiknya untuk mendapatkan pengakuan internasional bagi pencaplokannya atas Timor-Leste. Segmen-segmen tersebut juga membahas mengenai penderitaan warga Timor-Leste selama tahun-tahun perang yang gencar, di gunung dan kamp-kamp pada masa pengeboman dan kelaparan yang membinasakan penduduk. Segmen-segmen ini menelusuri pergeseran strategi oleh Fretilin/Falintil setelah mereka hampir dihancurkan dalam serangan-serangan pada 1978; pertumbuhan jaringan klandestin di kota dan desa di seluruh negeri; dan ekspansi teritorial militer Indonesia serta jaringan intelijen yang intensif. Tahun-tahun konsolidasi baik oleh pemerintahan Indonesia maupun Resistansi, selama dasawarsa 1980-an, dijelaskan dengan fokus pada upaya mengembangkan rasa persatuan nasional dan bangkitnya generasi baru pemuda dalam perlawanan terhadap pendudukan.

6. Kejadian seperti Pembantaian Santa Cruz, tertangkapnya Xanana Gusmão, dan Penganugerahan Nobel Perdamaian pada dasawarsa 1990-an digambarkan sebagai titik-titik balik dalam perjuangan bangsa Timor-Leste dalam mendapatkan pengakuan atas hak untuk menentukan nasib sendiri. Segmen-segmen berikutnya membahas dampak krisis keuangan Asia di Indonesia dan di Timor-Leste, serta intensifikasi upaya internasional di bawah Sekretaris Jenderal PBB yang baru, Kofi Annan, untuk menemukan solusi bagi persoalan Timor-Leste. Dengan kejatuhan Presiden Soeharto, segmen ini menelusuri upaya di dalam Timor-Leste dan di kancah internasional untuk mencari penyelesaian, serta kemunculan milisi di Timor-Leste ketika menjadi jelas bahwa upaya tersebut dapat mencakup pilihan bagi warga Timor-Leste untuk merdeka. Segmen ini menggambarkan perkembangan pesat pada 1999 menjelang Kesepakatan 5 Mei, dan kekerasan oleh milisi-TNI terhadap penduduk sipil menjelang pengumuman hasil Jajak Pendapat. Masa UNAMET dan bagaimana Jajak Pendapat ini dijalankan juga dijelaskan. Segmen ini lebih lanjut membahas secara mendalam mengenai kegagalan Indonesia untuk menjamin keamanan selama dan sesudah Jajak Pendapat, dan peran TNI serta kelompok milisi dalam peningkatan kekerasan di seluruh wilayah setelah pengumuman Jajak Pendapat yang menolak paket otonomi khusus. Dijelaskan juga mengenai upaya warga Timor dan internasional untuk menjamin intervensi guna menghentikan kekerasan dan memastikan bahwa hasil Jajak Pendapat dihormati oleh Indonesia. Segmen ini berakhir dengan kedatangan Interfet serta kembalinya para pengungsi Timor-Leste secara bertahap dari Timor Barat dan wilayah Indonesia lainnya, dari Portugal, Australia, dan banyak negara lain di dunia tempat mereka menyebar selama masa konflik.

7. Harapan Komisi ialah bahwa sejarah singkat ini akan membantu pembaca memahami isi dari bagian dan bab-bab lain dalam Laporan ini, dan bahwa hal ini akan mengilhami generasi sejarawan Timor-Leste sekarang dan masa mendatang untuk terus bekerja dalam memahami masa lalu kita sebagai bagian dari upaya berkesinambungan untuk membangun masa depan yang didasarkan pada penghormatan pada sesama, pada hak asasi manusia, dan pada rasa cinta damai.

Penjajahan Portugis atas Timor-Leste

Tinjauan

8. Keterlibatan Portugal di Timor dimulai pada abad ke-16 saat orang-orang Portugis mencari kayu cendana. Pada akhir abad ke-16 Gereja Katolik pertama dibangun di Lifau, Oecussi, yang menjadi basis pemerintahan Portugis pertama di Timor. Portugal dan Belanda mempunyai hubungan yang tegang sebagai dua kekuatan penjajah utama di kepulauan ini, dan pada abad ke-18 kekuatan militer Belanda menjadi seimbang dengan kekuatan Portugal. Portugal memindahkan basisnya ke Dili pada 1771 dan semakin menitikberatkan upaya penjajahannya pada belahan timur kepulauan ini. Pada paruh kedua abad ke-19, Portugal secara paksa memperkenalkan tanaman perdagangan seperti kopi

di Timor dan berusaha mengonsolidasikan pemerintahan kolonialnya dengan menerapkan pajak dan kerja paksa, yang mendorong terjadinya sejumlah pemberontakan rakyat Timor. Taktik penjajah untuk memecah-belah dan menguasai digunakan untuk memecah-belah dan melemahkan kepemimpinan tradisional Timor.

9. Pada 1913, batas wilayah kolonial antara Timor Portugis dan Timor Belanda ditetapkan melalui sebuah keputusan oleh mahkamah internasional di Den Haag, yang dikenal dengan nama *Sentença Arbitral*, di mana Portugal mengambil paruh timur pulau dan wilayah kantong Oecussi. Pada abad ke-20, Portugal didominasi oleh rezim otoriter Perdana Menteri Salazar. Timor merupakan wilayah jajahan Portugal paling terpencil, dan sebagian besar pembangunan di sana, baik fisik maupun politik, dilupakan.

10. Perang Dunia Kedua mendatangkan kekerasan luarbiasa di Timor, saat Tentara Sekutu mendarat di wilayah netral Timor Portugis, diikuti oleh pasukan pendudukan Jepang. Jumlah kematian di antara penduduk Timor mencapai antara 40.000 sampai 60.000 orang. Setelah Perang Dunia Kedua, pemerintahan kolonial Portugis kembali. Timor tetap menjadi pulau yang miskin meskipun relatif tenang sampai Revolusi Anyelir pada 25 April 1974 akhirnya membuka peluang untuk dekolonisasi di Timor-Leste.

11. Komisi mengidentifikasi tiga dampak penting kolonisasi Portugal atas Timor-Leste. Pertama, taktik penjajah mengadu domba berbagai kelompok sosial melemahkan aliansi politik pribumi. Hal ini menghambat berkembangnya persatuan sebagai prasyarat membangun bangsa. Kedua, tradisi memerintah sendiri tidak berkembang. Sebagian besar masyarakat Timor-Leste dibelenggu sistem feodal. Ketiga, rezim penjajah Portugis tidak mengembangkan atau melembagakan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia, terlepas dari telah adanya norma tradisional dan norma keagamaan yang dikembangkan oleh pihak Gereja. Karena itu, aktivitas politik yang muncul pada 1974 - 1975 menghadapi risiko distorsi dan manipulasi yang luas. Semua faktor ini turut berperan dalam munculnya kekacauan dan konflik internal yang terjadi selama proses dekolonisasi pada 1975. Selama perang saudara pada Agustus 1975, Portugal menarik diri. Partai Fretilin keluar sebagai pemenang dalam perang saudara tersebut, dan memulai suatu administrasi pemerintahan sementara yang hanya berfungsi sebagian. Semua faktor ini turut berperan memuluskan invasi Indonesia ke Timor-Leste pada 1975 tanpa banyak protes internasional.

Kedatangan Portugis

12. Orang Portugis datang pertama kali ke Timor untuk mencari kayu cendana putih pada awal abad ke-16. Setelah menaklukkan Malaka pada 1511, misionaris Portugis membangun gereja pertama di pulau ini pada 1590.² Ini mengawali periode pemukiman di Lifau (Oecussi), yang terletak di pantai utara bagian barat Timor, oleh para biarawan Fransiskan, pedagang cendana, dan *Topasses*, kelompok ras

campuran berayahkan pelaut, pedagang, dan tentara Portugis, yang keturunannya masih ada di Timor sampai saat ini. Portugal telah membentuk koloni di berbagai pulau lain di kawasan ini, tapi semuanya tidak aman. Belanda segera mengusir orang-orang Portugis dari Malaka, dari Makassar di Sulawesi, dan pada 1652, dari benteng yang baru dibangun Portugis di Kupang, Timor bagian barat, hanya lima tahun sesudah benteng itu selesai dibangun.¹

13. Pada 1702, Pemerintah Portugis secara resmi hadir di Lifau, dan memerintah Timor dari koloninya di Goa. Pendekatan gubernur dengan memberikan pangkat militer kepada raja-raja setempat (*liurai*) menciptakan preseden bagi pemerintahan Timor yang akan berlanjut hingga abad ke-20. Namun, Portugal menghadapi perlawanan dari para *liurai* yang gemar menjelajah serta dari para *Topasses*, yang pada masa itu menguasai perdagangan cendana dan, meskipun keturunan Portugis, mereka jarang mau bekerja sama. Karena tidak mampu memantapkan kekuasaannya di Lifau, Portugal pindah ke Dili pada 1769. Kepindahan ini mempertemukan mereka dengan masyarakat Belu yang mendiami bagian timur pulau ini.

Konsolidasi kekuasaan kolonial

14. Dari basis barunya di Dili, Portugal memiliki pengaruh dan kontrol geografis yang terbatas atas Timor-Leste. Resistansi lokal dan kurangnya kemampuan militer membatasi kekuasaan Portugal di pantai utara untuk waktu yang cukup lama. Pada 1851, Gubernur Lopes da Lima memulai serangkaian perundingan rumit mengenai wilayah darat dengan pejabat kolonial Belanda, yang melibatkan para *liurai* dan tanah-tanah warisan di sejumlah wilayah perbatasan seperti Maucatar, lebih jauh di dalam Timor-Leste di Maubara, dan Pulau Flores yang dikuasai Portugal. Berbagai perundingan tersebut melahirkan prinsip pertukaran wilayah antara Portugal dan Belanda dengan tujuan menetapkan garis batas berdasar pembagian timur-barat pulau di antara kedua kekuatan kolonial. Hal ini meringankan beban Portugal karena tidak perlu terlibat perang kolonial dengan Belanda, sehingga memungkinkannya memperkuat kekuasaannya di timur pulau tersebut. Pada 1895, Portugal membentuk unit-unit militer/pemerintahan di kesepuluh distrik di wilayah Timor-Leste. Oecussi ditambahkan sebagai distrik kesebelas Timor-Leste.³ Portugal membangun barak militer, kantor, sejumlah sekolah, rumah sakit, dan penjara di distrik-distrik tersebut sebelum akhir abad ke-19. Gereja Katolik, yang sempat dilarang selama 20 tahun sejak 1834, dipulihkan kembali dan Uskup Medeiros diterima dengan tangan terbuka.

15. Berbagai perundingan wilayah yang dimulai oleh Gubernur Lopes da Lima pada 1851 berpuncak pada kesepakatan antara Portugal dan Belanda untuk membawa

.....
* Perang Penfui antara kekuatan kolonial Portugis dan Belanda terjadi pada pertengahan abad ke-17, dan merupakan titik balik untuk Portugal. Penfui berada di utara Kupang, dekat dengan lokasi lapangan udaranya sekarang. Kekalahan Portugal di tangan kekuatan tentara Belanda berarti bahwa para *topasses* dengan dukungan Portugal secara efektif diusir dari pelabuhan besar pulau tersebut di Kupang, sebagai bukti nyata kejayaan tentara Belanda. Tempat peperangan tersebut juga terletak berdekatan dengan penjara tempat 69 tahanan politik dari Timor-Leste diambil pada 1983, di dalam operasi setelah pembantaian Kraras. [Lihat Bab 7.4 Penahanan Sewenang-wenang, Penyiksaan, dan Penganiayaan.]

masalah tersebut ke Mahkamah Internasional di Den Haag, tempat kesepakatan mengenai batas-batas wilayah jajahan diputuskan dalam *Sentenca Arbitral* pada 1913. Pertukaran wilayah terakhir antara Belanda dan Portugal sesuai dengan keputusan tersebut terjadi pada 1917.⁴ Hasilnya, Timor-Leste menjadi satu-satunya wilayah kolonial Portugal di kepulauan ini, sehingga Belanda menjadi kekuasaan kolonial yang mulai dominan.

16. Putusan akhir resmi mengenai batas-batas internasional antara Belanda dan Portugal menjadi titik acuan yang sangat penting bagi masa depan politik Timor-Leste. Pada saat Indonesia berjuang dan meraih kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua, Indonesia mengklaim wilayah nasionalnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan bekas garis batas wilayah jajahan Belanda. Atas dasar inilah Indonesia terus memperjuangkan dan akhirnya berperang untuk merebut Irian atau Papua Barat pada dasawarsa 1960-an. Sementara pernah berkembang sejumlah wacana mengenai suatu konsep “Indonesia Raya” selama perjuangan kaum nasionalis, yang meliputi wilayah Malaya dan Borneo Inggris, hal ini tidak pernah secara sungguh-sungguh diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam submisinya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai klaim atas Irian pada akhir dasawarsa 1950-an, Indonesia membantah secara eksplisit klaim apapun atas Timor Portugis.⁵ Belakangan, pada 1974 - 1975, dan dalam tahun-tahun sesudahnya, Pemerintah Indonesia tidak pernah secara sungguh-sungguh mencoba untuk mengajukan klaim bahwa Indonesia memiliki klaim teritorial atas wilayah Timor Portugis terdahulu.

17. Sama pentingnya dan bersumber dari hubungan kolonial ini, Pemerintah Portugal tidak pernah melepaskan posisinya sebagai penguasa administrasi yang sah atas Timor-Leste selama periode mandat Komisi. Ini memungkinkan persoalan Timor-Leste tetap hidup dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, dan merupakan faktor yang secara fundamental membedakannya dengan perjuangan nasionalis atau separatis lainnya dalam wilayah negara kepulauan Indonesia dalam abad ke-20.

Pemerintahan Portugis dan resistansi rakyat Timor

18. Portugal menjalankan pemerintahan tidak langsung melalui para *liurai*, yang kerja samanya didapat Portugal dengan memberi mereka otonomi di wilayah mereka masing-masing. Portugal memanfaatkan persetujuan antara para *liurai*. Dengan melakukan hal itu, mereka dapat mengakses kekuatan pasukan kecil mereka, atau kelompok-kelompok milisi⁶ yang mereka gunakan untuk memperbesar sumberdaya militer mereka sendiri yang terbatas.⁶ Portugal pertama kali menggunakan milisi para *liurai* yang loyal pada 1642 dalam kampanye memerangi Kerajaan Wehale,⁷ dan terus melakukan hal itu sampai penumpasan pemberontakan Viqueque pada 1959. Bagi Portugal, harga kebijakan memecah-belah dan menguasai ini adalah perlawanan kecil-kecilan yang terus-menerus terhadap kekuasaan Portugis. Bagi rakyat Timor-Leste, harganya adalah kelemahan dan perpecahan yang tak kunjung berakhir.

* Dalam bahasa Portugis disebut *moradores* atau *arraias*.

19. Kekuasaan dan kemakmuran Portugal menurun selama abad ke-17 dan ke-18. Dari semua wilayah jajahannya, Timor Portugis adalah yang paling terencil dan tidak penting. Portugal membuat investasi ekonomi dan politik yang terbatas di wilayah ini. Menurunnya harga cendana mendorong Portugal untuk memperkenalkan tanaman pertanian baru pada abad ke-19 untuk membangun sektor ekspor. Namun, ekonomi pertanian subsisten Timor Portugis hanya menyisakan sedikit sekali tenaga kerja, yang dibutuhkan untuk tanaman pertanian jenis ini. Pada sekitar 1859, Gubernur Castro menerapkan penanaman paksa untuk tanaman perdagangan baru ini, terutama kopi, tapi juga gandum dan spesies tanaman asing lainnya. Portugal tetap menjajah Timor secara tidak langsung, yang membuat pemerintahan sulit diatur, khususnya dengan adanya resistansi terhadap berbagai kebijakan ekonominya yang memaksa. Gubernur Celestino da Silva melanjutkan sistem kerja paksa ini pada dasawarsa 1890-an dan 1900-an, dengan ciri khususnya yaitu pembangunan jalan. Kebijakan pajak yang mencekik dan kerja paksa, yang keduanya merupakan akibat dari investasi Portugal yang terlalu sedikit di wilayah jajahan ini, sangat tidak populer.

20. Resistansi para *liurai* muncul segera setelah pengangkatan seorang gubernur di Lifau. Pemberlakuan upeti, yang disebut *finta*, pada sekitar 1710, memicu pemberontakan dan kebencian yang terus berlanjut yang punya andil dalam memaksa Portugal untuk pindah ke Dili pada 1769.⁸ Portugal tidak mengalami perlawanan yang berarti sampai ketika Gubernur Castro menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan penanaman kopi. Kebijakan yang tidak populer ini memicu pemberontakan pada 1861 yang diikuti oleh serangkaian pemberontakan lokal yang dipimpin oleh para *liurai* terhadap berbagai eksekusi penjajahan. Sebagai tanggapannya, pemerintahan Portugis memberlakukan kontrol langsung atas Timor-Leste pada 1895 ketika Gubernur Celestino da Silva membentuk pemerintahan dan militer di seluruh Timor-Leste, membagi wilayah tersebut menjadi sebelas distrik, termasuk daerah kantong Oecussi.⁹

21. Akibatnya, Portugal memisahkan Timor dari Goa, menjadikannya distrik pemerintahan terpisah pada 1896. Namun demikian pemberontakan terus berlanjut. Yang terakhir dan terbesar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh *liurai* Manufahi, Dom Boaventura, yang memberontak melawan pajak kepala pada 1908. Resistansi Dom Boaventura ini berawal dari pemberontakan yang dipimpin oleh ayahnya; *liurai* Dom Duarte memimpin berbagai pemberontakan pada akhir abad ke-19 sampai Gubernur Celestino da Silva menyerang kerajaan Same pada 1895 dan Dom Duarte dipaksa untuk menyerah pada 1900. Setelah Gubernur da Silva mengganti *finta* dengan pajak kepala pada 1908, Dom Boaventura, anak Dom Duarte, memberontak pada 1911. Pihak Portugal mengerahkan pasukan tentara *liurai* yang amat besar yang berjumlah 12.000, serta mendatangkan pasukan dari Mozambik, dan dengan kejam menumpas pemberontakan ini pada 1912. Aksi ini menciptakan suatu stabilitas, tetapi dengan harga kematian dan penderitaan yang amat besar. Diperkirakan 25.000 orang meninggal dalam kampanye menumpas pemberontakan ini.¹⁰ Dom Boaventura ditangkap dan diasingkan ke Pulau Ataúro dan meninggal di sana. Setelah itu Portugal memberikan kewenangan langsung pada

desa (*suco*) sebagai pemerintahan lokal, dengan demikian memotong kewenangan *liurai*, mengurangi pengaruh mereka, dan menetapkan kontrol Portugal yang lebih langsung terhadap semua daerah di pedalaman Timor Portugis.

Timor Portugis pada abad ke-20

22. Sepanjang abad ke-20, Portugal sendiri menghadapi ketidakstabilan di dalam negeri. Pada 1912, Kerajaan Portugis berubah menjadi republik, yang kemudian berganti menjadi negara satu partai pada 1928. Pada masa ini, banyak orang Tionghoa yang masuk wilayah koloni Timor Portugis, dan memulai peran mereka sebagai perantara usaha, pengeksport, dan pedagang. Melengkapi aktivitas ekonomi orang Tionghoa ini, meskipun menghadapi banyak masalah di dalam negeri, Portugal membentuk SAPT (*Sociedade Agricola Pátria e Trabalho*), konglomerat perdagangan yang membawa infrastruktur baru untuk produksi dan ekspor.¹⁰ Walaupun demikian, Timor Portugis tetap merupakan wilayah jajahan terpencil yang berjalan dengan personil atau investasi yang minim dari Portugis. Pada 1929, hanya terdapat 200 warga negara Portugis, ditambah 300 serdadu.¹¹ Portugal terus memerintah melalui perantara lokal. Pada 1930, Undang-Undang Kolonial Perdana Menteri Salazar membentuk dewan perwakilan lokal yang pada dasarnya lemah, dan memungkinkan penduduk lokal secara terbatas untuk memperoleh status kewarganegaraan Portugis.

Perang Dunia Kedua

23. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor pada Desember 1941, Australia mengantisipasi bahwa Jepang akan menduduki Timor dan menggunakan Timor sebagai pangkalan untuk melancarkan serangan terhadap Australia. Pasukan Australia, Inggris, dan Belanda mendarat di Dili pada 17 Desember 1941 dalam aksi yang disebut tindakan pencegahan memprotes pelanggaran terhadap kenetralan Portugis. Jepang menyerang Timor pada 19 Februari 1942. Masih menjadi bahan perdebatan historis apakah pelanggaran yang dilakukan Tentara Sekutu terhadap kenetralan Portugis benar-benar diperlukan untuk menangkis serangan Jepang, atau apakah kehadiran Australia di Timor Portugis justru telah memancing militer Jepang ke wilayah yang sebetulnya tidak akan diserangnya.¹²

24. Dampak perang tersebut terhadap rakyat Timor sungguh membinasakan. 40.000 dan 60.000 penduduk Timor dilaporkan meninggal.¹³ Banyak yang dibunuh dan disiksa oleh tentara Jepang karena dicurigai membantu gerilyawan Australia. Perbudakan seksual terhadap perempuan Timor yang dilakukan oleh para tentara Jepang banyak terjadi. Selain itu, wilayah ini menjadi miskin akibat perang tersebut, dan benih perpecahan tersebar antara mereka yang mendukung Jepang dan mereka yang mendukung pasukan kecil gerilya Australia. Komisi mendengar kesaksian mengenai dampak berkepanjangan dari konflik ini terhadap masyarakat Timor

* SAPT dijalankan oleh perusahaan kontraktor Brasil yang bernama Moniz da Maia Serra e Fortunato.

dalam audiensi publik mengenai konflik internal 1974 - 1976.¹⁴ Tidak pernah ada penyelidikan internasional mengenai berbagai kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua negara yang menduduki, dan tidak pernah ada reparasi perang kepada orang-orang Timor.¹⁵

Gerakan internasional untuk dekolonisasi dan posisi Portugal

25. Pasal 73 dalam Piagam PBB 1945 menyerukan kepada negara-negara penjajah untuk memberikan perhatian serius kepada berbagai aspirasi negara-negara jajahannya dan secara bertahap memberikan otonomi. Kesepakatan internasional ini terus berkembang sejalan dengan sebagian besar penjajah memberikan kemerdekaan kepada wilayah-wilayah jajahannya setelah Perang Dunia Kedua, dan diungkapkan melalui berbagai mekanisme seperti Sidang Umum PBB yang pada 1960 mengakui penjajahan sebagai pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia.^{*} Pada 1960, Timor Portugis dicantumkan sebagai Wilayah Tidak Berpemerintahan Sendiri dalam Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi, yang mengakui hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor, yang tetap relevan sampai Jajak Pendapat yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1999.

26. Menanggapi kesepakatan internasional yang semakin berkembang mengenai pentingnya dekolonisasi ini, Portugal menamai ulang wilayah-wilayah jajahannya sebagai 'provinsi seberang lautan' pada 1951. Hal itu merupakan langkah paternalistik yang dirancang untuk "memberadabkan" rakyat jajahannya dan meredam kritik, namun tidak mengubah banyak. Hal ini khususnya terjadi di Timor Portugis, yang tetap sangat terisolasi. Tidak pernah ada gerakan kemerdekaan seperti yang terjadi di wilayah jajahan Portugal di Afrika. Sebaliknya, kehidupan orang-orang Timor-Leste pada 1950-an masih jauh dari beradab. Pastor Martinho da Costa Lopes mengatakan bahwa selama 400 tahun penjajahan Portugis tidak satu pun pengacara, insinyur, atau dokter lahir di Timor.¹⁶ Sangat sedikit orang pribumi Timor yang menikmati hak yang sama dengan penjajahnya, dan terus diperlakukan dengan buruk dan hak atas kepemilikan mereka terus dilanggar oleh Portugal.¹⁷ Dalam suatu kesempatan, Uskup Carlos Belo membicarakan tentang hal ini:

Saya sering melihat orang Portugis mengambil tuak dari penduduk asli yang sebenarnya untuk dijual, tanpa membayar, padahal orang pribumi itu sudah berjalan jauh ke pasar untuk menjual tuaknya dan berharap mendapatkan sedikit uang untuk dibawa kembali ke desanya. Mereka ditindas, tapi tidak membela dirinya. Setiap kali saya melihat hal ini hati saya sakit dan saya menangis di dalam hati. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa.¹⁸

^{*} Resolusi Sidang Umum PBB 1514 (XV), 1960: "Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Rakyat Jajahan."

27. Meskipun penggunaan pecut dan pentungan dilarang oleh Portugal pada 1956, kebiasaan mencambuk terus terjadi.¹⁹ Xanana Gusmão pernah mengatakan:

Saya melihat tahanan dicambuk di pos-pos [pemerintah]. Mereka mengerang kesakitan karena dipaksa berdiri di batu karang yang panas karena terik matahari, dengan kaki yang dirantai. Kadang-kadang ketika saya jalan-jalan dengan teman-teman sekolah—anak-anak *liurai*—saya juga melihat pejabat atau orang lokal dikirim dalam kelompok-kelompok atau kembali dengan orang-orang yang bersimbah darah, karena mereka tidak datang untuk kerja paksa membangun jalan, atau bekerja sebagai *asu-lear* [sic] [buruh] di lahan para penjajah, orang Cina, atau orang Timor yang sudah bercampur.²⁰

28. Pada 1959, sekelompok orang Indonesia yang diasingkan terlibat dalam suatu pemberontakan di Viqueque melawan pemerintahan kolonial Portugis. Portugal mengetahui rencana tersebut dan menghancurkannya dengan bengis, mengakibatkan pertumpahan darah hebat. Latar belakang dari berbagai peristiwa tersebut sampai sekarang sebagian besar tetap tidak diketahui. Sebuah laporan resmi Portugis dari masa itu menyalahkan Indonesia atas terjadinya pemberontakan tetapi masih belum pasti apakah memang demikian kejadiannya. Setelah berbagai peristiwa tersebut, pada 1959, pemerintah Portugis membuka cabang polisi rahasia (*Polícia Internacional e de Defesa do Estado*, PIDE) di Dili untuk memonitor kegiatan Indonesia dan sentimen anti Portugis.²¹

Rencana pembangunan Portugis dan berkembangnya sentimen anti-penjajah

29. Pada 1953, pemerintah pusat Portugal mulai menjalankan serangkaian rencana pembangunan untuk menghidupkan kembali ekonomi dalam negerinya yang stagnan. Di Timor Portugis rencana ini mencakup meningkatkan produksi dan ekspor kopi, eksplorasi pertambangan, dan pembangunan pariwisata di Timor Portugis. Perbaikan infrastruktur mencakup pembangunan jalan, perbaikan pelabuhan Dili dan pelabuhan udara Baucau, serta listrik dan sistem air bersih di Dili.²² Pada 1975, terdapat 17 atau 18 dokter yang bekerja di rumah sakit Dili dan berbagai klinik di daerah.²³

30. Namun, kesempatan penduduk Timor-Leste untuk memperoleh pendidikan tetap terbatas selama masa penjajahan Portugis. Anak-anak *liurai* mulai dapat merasakan pendidikan dasar pada 1860, kemudian pada 1904 para Yesuit membuka sekolah misionaris di Soibada dan menjadi tempat pembelajaran penting untuk rakyat Timor dari seluruh wilayah negeri.[†] Meski demikian, pendidikan ala Barat

* *Plano de Fomento*.

† Sekolah-sekolah tersebut, Colégio Nuno Alveres Pereira (untuk laki-laki) dan Imaculada da Conceição (untuk perempuan), mengadakan perayaan 100 tahunnya pada 2004.

masih merupakan hak eksklusif warga negara Portugis dengan sedikit pengecualian. Pada 1964, hanya sepuluh orang Timor yang memiliki gelar.²⁴ Menurut data statistik Portugis, antara 1950 dan 1970, pendaftaran di pendidikan dasar meningkat sepuluh kali lipat, dari 3.249 menjadi 32.937.²⁵ Sensus 1970 menunjukkan sekitar 10 persen penduduk yang bisa baca tulis di wilayah koloni ini. Pada waktu itu pemerintah Portugis telah membangun sekolah menengah di Dili, *Liceu* Dr. Francisco Machado, dengan 767 murid.²⁶ Renungan mengenai terbatasnya kesempatan atas pendidikan di negeri ini terlihat dari kenyataan bahwa para pelopor utama gerakan kemerdekaan Timor-Leste sebagian besar adalah didikan seminari.

31. Semakin menyadari ketimpangan yang terjadi, suatu generasi baru orang-orang Timor-Leste yang terpolitisasi juga merasa frustrasi dengan ketiadaan sarana politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat Timor. Orang-orang Timor mempunyai peran yang kecil dalam mengatur urusan wilayah jajahan ini. Gubernur provinsi ini mewakili pemerintah Portugis, bukan mewakili rakyat Timor, dan memegang kekuasaan eksekutif yang luas. Meskipun terdapat Dewan Legislatif yang beranggotakan 11 orang, hanya tiga orang wakil yang dipilih. Dewan tidak mungkin dapat mewakili aspirasi rakyat, dan hanya memiliki kewenangan yang terbatas.²⁷ Meskipun ada resolusi PBB yang mendesak Portugal untuk memberikan kebebasan politik kepada wilayah-wilayah jajahannya,²⁸ rezim Salazar dan kemudian Caetano mengingkari demokrasi bagi warga negaranya sendiri, apalagi bagi rakyat jajahannya. Keadaan ini baru berubah seiring naiknya Jenderal Spínola ke tampuk kekuasaan setelah Revolusi Anyelir pada 25 April 1974.

Perubahan di Portugal dan proses dekolonisasi

Tinjauan

32. Gerakan pembebasan nasional dasawarsa 1960-an di berbagai koloni Portugal di Afrika berubah menjadi perjuangan bersenjata untuk mencapai kemerdekaan. Terpaksa terlibat secara serempak dalam beberapa perang terpisah di sejumlah wilayah yang berjauhan, Portugal, negara kecil yang relatif miskin, mengalami tekanan politik dan ekonomi yang luarbiasa pada saat negara ini semakin mengandalkan Eropa untuk masa depan ekonominya. Pada 1968, setelah 40 tahun berkuasa, Perdana Menteri Salazar yang otoriter digantikan oleh Marcelo Caetano, yang gagal menemukan jalan keluar bagi berbagai konflik bersenjata yang semakin menguras dana tersebut. Putusa dengan berbagai kegagalan ini, Gerakan Angkatan Bersenjata (*Movimento das Forças Armadas*, MFA) muncul dalam tubuh militer dan pada 25 April 1974 memimpin kudeta yang berhasil menggulingkan rezim Caetano tanpa pertumpahan darah, yang dikenal dengan nama Revolusi Anyelir. Meskipun MFA telah membuka jalan untuk dekolonisasi, MFA juga menyebabkan terjadinya pergolakan politik di Portugal selama beberapa tahun. Kekacauan ini dan tersitanya

* Persentase buta huruf di Dili adalah 14% dan di kota-kota distrik lain 45%.

perhatian Portugal pada wilayah jajahannya yang lebih besar di Afrika, merupakan faktor penting penyebab kegagalan Portugal untuk memberikan perhatian yang layak kepada dekolonisasi di wilayah jajahannya yang paling jauh, Timor.

MFA dan Revolusi Anyelir

33. Pada awal dasawarsa 1960-an, gerakan kemerdekaan di wilayah-wilayah jajahan Portugal di Afrika mulai melakukan perjuangan bersenjata. MPLA (*Movimento Popular de Libertação de Angola*) di Angola mengangkat senjata pada 1961, diikuti oleh PAIGC (*Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde*) di Guinea Bissau pada 1963 dan Frelimo (*Frente de Libertação de Moçambique*) di Mozambik pada 1964. Goa, koloni Portugis, “dibebaskan” oleh pasukan India pada 1961.²⁹ Memerangi tiga perang sekaligus sangat membebani Portugal secara keuangan dan militer. Pada saat yang sama, setelah bergabung dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (*European Free Trade Association, EFTA*) pada 1961, Portugal menjadi semakin terikat dengan Eropa dalam hal ekonomi dengan akibat terlantarnya wilayah-wilayah jajahannya di Afrika. Pada awal 1970-an, berbagai kebijakan ekonomi proteksionis yang dirancang untuk membantu mengembangkan perdagangan dan investasi dengan wilayah-wilayah jajahannya tidak lagi sesuai dengan kepentingan para konglomerat Portugis yang perhatiannya semakin mengarah ke Eropa.

34. Karena telah hilang kepercayaannya pada kemampuan Salazar, kemudian pada Caetano untuk menemukan pemecahan atas perang di Afrika, angkatan bersenjata berpaling pada Jenderal António Spínola, yang adalah rekan dekat Caetano. António Spínola pernah mengusulkan sebuah program reformasi, yang ditolak oleh Caetano. Untuk menyebarluaskan gagasan-gagasannya, Spínola menerbitkan sebuah buku berjudul *Portugal and its Future* (Portugal dan Masa Depan), yang mengusulkan penyelesaian atas perang kolonial melalui Jajak Pendapat tentang hubungan federasi dengan Portugal. Ketika MFA berdiri pada 5 Maret 1974, gerakan tersebut memilih Jenderal Spínola sebagai pemimpinnya, dan pada waktu MFA melancarkan Revolusi Anyelir pada 25 April 1974, Spínola dipilih oleh gerakan tersebut sebagai presiden.

Dekolonisasi yang cepat, kekacauan di Portugal

35. Meskipun Revolusi Anyelir pada awalnya berjalan mulus di Portugal, bulan-bulan dan tahun-tahun setelahnya merupakan masa ketidakstabilan politik, saat beberapa pemerintahan minoritas berturut-turut terbentuk, dan runtuh, sampai Partai Sosialis berkuasa pada 1982. Ketidakstabilan ini membatasi kemampuan Portugal untuk secara efektif menangani berbagai peristiwa yang terjadi di Timor. Dengan destabilisasi aktif yang dilancarkan oleh Indonesia, Pemerintah Portugal tidak mampu menjalankan proses dekolonisasi.

36. Pada April 1974, MFA segera membentuk Dewan Penyelamat Nasional (*Junta de Salvação Nacional, JSN*) dan mengangkat Spínola sebagai pemimpinnya. Manifesto JSN mengusulkan demokratisasi di dalam negeri Portugal, termasuk pembubaran polisi rahasia, dan pembebasan para tahanan politik. Mengenai masalah kolonial,

Manifesto JSN secara samar menyerukan pemecahan politis melalui debat nasional yang mengarah pada suatu pemecahan secara damai,³⁰ namun menghindari penyebutan penentuan nasib sendiri dan otonomi.³¹ Presiden Spínola membentuk pemerintahan sementara yang baru pada 15 Mei 1974, dengan Adelino de Palma Carlos sebagai Perdana Menteri. Pada hari yang sama, pemerintahan tersebut mengeluarkan Dekrit No. 203/1974, yang mengemukakan kebijakan dekolonisasi. Dekrit tersebut mengikat pemerintah untuk melakukan penyelesaian politik berdasarkan prinsip penentuan nasib sendiri.³²

37. Solusi federal Spínola tidak memperoleh dukungan yang berarti. Di Portugal, opini publik semakin condong memilih mundur dari wilayah-wilayah jajahan mereka. Sadar akan keunggulan militer mereka atas militer Portugis yang terkepung, wilayah jajahan Guinea-Bissau dan Mozambik tidak berniat untuk melakukan kompromi mengenai tuntutan mereka untuk merdeka. Beberapa anggota kabinet yang berpengaruh, termasuk Menteri Luar Negeri dan Ketua Partai Sosialis, Mario Soares, juga memilih kemerdekaan sebagai jalan keluar.

38. Pada pertengahan 1974, bahkan dalam tubuh MFA sendiri dukungan untuk federasi semakin melemah, dan penarikan secepatnya menjadi opsi militer yang lebih disukai. Berbagai tekanan ini berbuntut pengunduran diri Adelino de Palma Carlos sebagai Perdana Menteri, dan penggantinya oleh Vasco Gonçalves. Pada 27 Juli, pemerintahan yang baru mengeluarkan Undang-Undang No. 7/1974, mengakui kemerdekaan sebagai hasil yang bisa diterima dalam proses penentuan nasib sendiri di wilayah-wilayah jajahan Portugal.³³ Pergeseran kebijakan ini berbuntut pengunduran diri Spínola pada September 1974. Dalam waktu satu tahun, lima wilayah jajahan Portugal di Afrika telah meraih kemerdekaan.

39. Setelah mengambil alih kekuasaan pada April 1974, MFA telah melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur yang mereka anggap reaksioner dalam pemerintahan sipil Portugis. MFA dengan cepat mengganti semua gubernur di wilayah-wilayah jajahannya di Afrika, tapi lebih lambat dalam melakukan tindakan yang sama di Timor Portugis. Meskipun dia telah membuat pidato yang mengkritik MFA atas radikalismenya, hanya dua hari sebelum 25 April, Gubernur Timor Portugis, Alves Aldeia, tetap menduduki jabatannya hingga tiga bulan kemudian. Perhatian Portugal pada waktu itu dan yang mengakibatkan terlantarnya Timor dirangkul oleh Gubernur Portugis terakhir untuk Timor, Mayor Jenderal Mário Lemos Pires, dalam kesaksian yang ia berikan kepada Komisi:

Bangsa Portugis yang muncul dari revolusi tersebut adalah bangsa yang lemah, tidak terpadu, dengan segala kesulitan dan tanpa kredibilitas di antara para mantan sekutu [Barat]-nya. Bangsa ini sangat khawatir tentang revolusinya dan berupaya untuk mencapai stabilitas politik, mengurus warga negaranya yang datang dari Afrika, dan dengan tegas memutuskan untuk mengakhiri perang di negara-negara Afrika... Apa yang orang Portugis pikirkan tentang Timor-Leste pada tahun 1974, setelah revolusi? Nihil, tidak banyak, sedikit. Nihil. Pikiran mereka adalah tentang revolusi dan keluarga mereka di wilayah-wilayah Afrika.³⁴

Dampak Revolusi Anyelir di Timor Portugis

40. Di Timor, berita tentang Revolusi Anyelir disambut dengan perasaan yang campur aduk antara kegembiraan dan kekhawatiran. Komisi mendengarkan kesaksian dari berbagai tokoh Timor dalam audiensinya mengenai Konflik Politik Internal tahun 1974 - 1976. Mereka mengisahkan tentang kegembiraan yang ditimbulkan oleh berbagai peristiwa di Lisabon dan berbagai wilayah jajahan lainnya di kalangan orang-orang muda yang tertarik politik. Tapi, pada umumnya mereka juga setuju bahwa sejarah Timor-Leste tak cukup mempersiapkan masyarakatnya untuk terlibat dalam kegiatan politik.³⁵

41. Pada awal Mei 1974, ketika Gubernur Alves Aldeia bertanya kepada JSN di Lisabon untuk menjelaskan kebijakan kolonialnya yang baru, ia diinstruksikan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip program MFA dan, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi setempat, berupaya untuk tidak memperburuk hubungan dengan Indonesia.

42. Pada 13 Mei Alves Aldeia membentuk Komisi Timor untuk Penentuan Nasib Sendiri yang, antara lain, mendorong terbentuknya serikat-serikat sipil.³⁶ Pada akhir Mei, Mayor Arnão Metello, kepala staf militer setempat, ditunjuk sebagai perwakilan MFA di koloni tersebut.³⁷

43. Bertolak belakang dengan sikapnya terhadap wilayah-wilayah jajahannya di Afrika, Pemerintah Portugis cenderung menganggap kemerdekaan Timor Portugis tidak realistis. Pada 3 Agustus 1974, Menteri Koordinator Antar-Wilayah, Antonio de Almeida Santos, berkeberatan dengan kemerdekaan penuh Timor Portugis, dan menyatakan federasi sebagai pilihan yang paling realistis.³⁸ Pendapat ini memicu reaksi keras dari serikat-serikat politik orang-orang Timor yang baru terbentuk, UDT (União Democrática Timorese, Uni Demokratik Timor) dan Fretilin.* Tapi pada hari yang sama, pemerintah Portugis mengajukan memorandum kepada Sekretaris Jenderal PBB yang mengakui hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan semua wilayah di bawah kekuasaannya, posisi yang dikuatkan kembali dua bulan kemudian oleh Menteri Luar Negeri Portugal, Mário Soares, di hadapan Sidang Umum PBB.³⁹ Hak penentuan nasib sendiri untuk semua wilayah jajahan juga dicantumkan sebagai suatu kewajiban bagi negara Portugal dalam konstitusi 1975. Ketentuan ini terbukti menjadi penting dalam melanjutkan komitmen resmi Portugal atas penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste dalam tahun-tahun selanjutnya yang berat.

Pembentukan partai-partai politik di Timor Portugis

44. Komisi mendengarkan kesaksian yang menggambarkan bagaimana Revolusi Anyelir segera menggelorakan perhatian rakyat Timor mengenai masa depan

* Domingos Oliveira, mantan Sekjen UDT, memberi kesaksian tentang perasaan marah rakyat Timor dengan pernyataan ini, di Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15 - 18 Desember 2003.

politik wilayah tersebut. Domingos de Oliveira, yang menjadi Sekretaris Jenderal UDT pada masa itu, menggambarkan fenomena tersebut:

Sebelum 25 April di Timor, kita biasa bicara tentang pacar-pacar kita, sepak bola, dan hal-hal semacam itu di kafe dan restoran, sambil minum bir dan bertemu teman-teman. Setelah 25 April, kita hanya bicara tentang konsekuensi 25 April. Apa yang harus kita sebagai orang Timor lakukan? Apa yang semestinya dilakukan dalam situasi baru seperti ini?⁴⁰

45. Di Dili, orang-orang Timor yang tertarik politik mulai memikirkan pembentukan serikat-serikat politik, dan mengadakan berbagai pertemuan untuk membahas prinsip-prinsip dan asasnya. Begitu terbentuk, serikat-serikat tersebut secara efektif berfungsi sebagai partai-partai politik, meskipun secara teknis partai-partai politik masih dilarang beroperasi.⁴¹

46. Serikat yang pertama terbentuk adalah Uni Demokratik Timor (*União Democrática Timorese*, UDT), yang didirikan pada 11 Mei 1974. Para pendirinya cenderung konservatif secara politik dan banyak di antaranya memiliki hubungan dengan penguasa kolonial Portugis, yang mencerminkan keistimewaan status dan fungsi sosial mereka sebagai perantara antara orang-orang Timor dan penjajah Portugis. Presiden pertama UDT adalah Francisco Lopes da Cruz. Para pendiri yang lain yaitu César Augusto da Costa Mouzinho sebagai Wakil Presiden; Carrascalão bersaudara, Manuel Carrascalão, Mario Carrascalão, dan João Carrascalão; serta Domingos de Oliveira, Sekretaris Jenderal serikat tersebut. Manifesto awal UDT mengusulkan 'otonomi progresif' di bawah Portugal, meskipun UDT juga mendukung hak untuk penentuan nasib sendiri. UDT mengumumkan perubahan posisinya pada 1 Agustus 1974 ketika menyatakan bahwa tujuan akhirnya adalah kemerdekaan setelah satu periode federasi dengan Portugal. UDT juga secara spesifik menolak integrasi dengan negara lain.⁴² Pergeseran UDT menunjukkan partai ini bisa berubah-ubah, dalam hal ini menanggapi perubahan dalam tatanan politik di Portugal dan kenyataan bahwa nasionalisme merupakan kekuatan yang semakin berkembang di dalam Timor.

47. Sembilan hari setelah berdirinya UDT, pada 20 Mei, Asosiasi Sosial Demokratik Timor (*Associação Social Democrata de Timor*, ASDT) didirikan. Para pendiri ASDT sebagian besar adalah pemuda Timor yang terpelajar, dari beragam latar belakang; beberapa dari dalam pemerintahan Portugis, yang lain dari kelompok bawahan antipenjajah pada awal 1970-an. Karena lebih tua dan lebih dikenal ketimbang para pendiri asosiasi yang berusia muda, Francisco Xavier do Amaral diangkat sebagai Presiden. Para tokoh kunci yang lain termasuk Mari Alkatiri, José Ramos-Horta, Nicolau Lobato, dan Justino Mota. ASDT menerbitkan manifestonya pada 22 Mei, yang menegaskan hak untuk merdeka serta sikap antipenjajahan dan nasionalisnya. Asosiasi itu juga menyatakan komitmennya untuk suatu kebijakan "bertetangga baik" dengan negara-negara kawasan ini tanpa merugikan kepentingan rakyat Timor.

48. Serikat ketiga yang terbentuk adalah Asosiasi Rakyat Demokratik Timor (*Associação Popular Democrática Timorese*, Apodeti), yang didirikan pada 27 Mei. Rencana awalnya adalah menamakan serikat tersebut 'Asosiasi untuk Integrasi Timor dengan Indonesia', namun meskipun nama ini secara lugas dapat menjabarkan tujuan utama Apodeti, nama itu tampaknya dianggap terlalu transparan. Presiden pendiri asosiasi ini adalah Arnaldo dos Reis Araújo, tapi ahli strateginya adalah José Fernando Osorio Soares, yang keluar dari ASDT untuk menjadi Sekretaris Jenderal Apodeti. Tokoh penting lain adalah pemilik perkebunan kopi, Hermenegildo Martins. *Liurai* Atsabe, Guilherme Maria Gonçalves, bergabung dengan Apodeti tidak lama setelah pembentukannya, dengan membawa pendukung yang berasal dari basis kekuasaan regionalnya. Konsul Indonesia di Dili, Elias Tomodok, menjadi penghubung penting untuk saran dan dukungan keuangan bagi Apodeti selama periode 1974 - 1975.⁴³ Manifesto Apodeti menyatakan tujuan integrasi yang bersifat otonom dengan Indonesia, sesuai hukum internasional, meskipun hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Indonesia. Senada dengan dua partai besar yang lain, Apodeti mengutuk sejumlah keburukan dalam pemerintahan Portugis seperti korupsi dan diskriminasi, dan juga berjanji akan menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu.

49. Tiga partai politik yang lebih kecil didirikan beberapa waktu setelah tiga partai politik yang pertama. José Martins, salah satu pendiri Apodeti, keluar dari Apodeti dan mendirikan sebuah partai para monarki (*liurai*), Perkumpulan Kesatria Putra Timor (*Klibur Oan Timor Aswain*, KOTA) pada 20 November 1974.⁴⁴ Martins sempat dikenal berkarier sebagai propagandis untuk pendudukan Indonesia, dan seorang kolaborator utama bagi intelijen Indonesia (Bakin) pada 1975. Partai Buruh (*Trabalhista*), didirikan pada September 1974 dan mempunyai tujuan kemerdekaan melalui federasi transisi dengan Portugal.⁴⁵ Partai yang ketiga, Asosiasi Demokratik untuk Integrasi Timor-Leste dengan Australia (*Aditla*), mengajukan bergabung dengan Australia, tetapi menghilang begitu Australia menolaknya pada Maret 1975.⁴⁶

50. Segera menjadi jelas bahwa UDT dan ASDT adalah dua partai yang memiliki dukungan rakyat di wilayah Timor-Leste.

Suasana internasional dan kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis

Tinjauan

51. Kesempatan dekolonisasi Timor Portugis muncul pada saat yang penting dalam Perang Dingin. Kemenangan Vietnam Utara di Vietnam pada April 1975 dan runtuhnya pemerintahan pro-Amerika Serikat yang hampir bersamaan di negara-negara Indocina lainnya, yakni Kamboja dan Laos, mengobarkan ketakutan di antara pembuat kebijakan Barat dan sekutu Asia mereka bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya juga rentan dan bahwa penyebaran komunisme

perlu dibendung dengan cara apapun. Dalam suasana seperti ini, Amerika Serikat dan sekutunya memandang Indonesia sebagai komponen yang penting dari strategi pasca-Vietnamnya untuk mencegah penyebaran komunisme lebih lanjut. Pada saat yang hampir bersamaan, Revolusi Anyelir menciptakan situasi politik yang sangat tak terkendali di Portugal, yang hasilnya mungkin akan memberi kemenangan kepada pihak kiri dan kekalahan berikutnya bagi pihak Barat.

52. Selain dukungan yang dinikmati sebagai akibat dari citranya yang antikomunisme, Indonesia juga berada dalam posisi untuk mengambil keuntungan dari statusnya sebagai pendiri Gerakan Non-Blok, hubungannya dengan negara-negara Islam lainnya melalui Organisasi Konferensi Islam, dan sebagai negara terbesar di Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations, atau ASEAN). Dukungan luas Indonesia, keengganan Portugal untuk menginternasionalkan persoalan, dan ketidakpedulian yang luas tentang nasib wilayah yang dipandang sebagai sisa kekuatan kolonial minor, semuanya menjadi faktor pemberat melawan peran aktif PBB atas persoalan Timor-Leste. Semua faktor ini memberi keuntungan bagi Indonesia dalam kampanyenya untuk menggalang dukungan bagi kebijakannya mengenai Timor-Leste.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Portugis

53. Selama 1975, Perang Dingin antara Timur dan Barat mencapai titik kritis, terutama karena perkembangan di Asia Tenggara. Pada April 1975, dua tahun setelah penarikan mundur pasukan AS dari Vietnam, Saigon jatuh ke tangan Vietnam Utara yang komunis. Pergeseran perimbangan kekuatan ini memengaruhi bangsa-bangsa besar dan kecil, serta memiliki dampak mendalam kepada apa yang terjadi di Timor Portugis.⁴⁷ Perang Dingin memberikan efek yang cukup mencekik di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada masa ini. Blok-blok kekuatan utama di dunia sering kali melumpuhkan lembaga-lembaga utamanya, seperti Dewan Keamanan. Salah satu ciri dalam krisis yang tengah berkembang di Timor Portugis selama 1974 - 1975 adalah kegagalan untuk menginternasionalisasikan persoalan ini dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Portugal melakukan serangkaian negosiasi bilateral dengan Indonesia, dan walaupun dalam negosiasi-negosiasi Portugal pernah menggunakan ancaman “internasionalisasi” sebagai senjata dalam tawar-menawarnya, pada praktiknya Portugal hanya menggunakan opsi ini ketika sudah amat terlambat dan secara efektif tidak mampu untuk memengaruhi situasi.⁴⁸

54. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk mengawasi dekolonisasi, Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi, disibukkan dengan keadaan di berbagai koloni Portugal di Afrika, dan tidak banyak memberi perhatian kepada Timor Portugis. Pada Juni 1975, Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi membahas Timor Portugis dan menganjurkan pencapaian tujuan-tujuan Piagam PBB mengenai Deklarasi Kemerdekaan bagi Negara dan Bangsa Kolonial. Walau telah diminta untuk menilai situasi di lapangan, Komite ini tidak melakukannya.⁴⁹ Kurangnya perhatian atas Timor Portugis ini pada 1974 - 1975 berarti bahwa ketika perang saudara pecah pada Agustus 1975, dan ketika kegiatan terselubung

Indonesia berubah menjadi operasi militer besar-besaran pada Oktober - November 1975, Perserikatan Bangsa-Bangsa relatif tidak menyadari akan situasi di wilayah ini. Kurangnya keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan kesempatan yang hilang untuk menghindari kekerasan dan pengambilalihan kekuasaan militer wilayah Timor Portugis oleh Indonesia (lihat Bab 7.1: Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri).

Indonesia dan masyarakat internasional

55. Dengan penduduk yang mendekati 165 juta pada pertengahan 1970-an, Indonesia merupakan negara yang paling banyak penduduknya di Asia Tenggara. Di bawah Presiden Soeharto, Indonesia mengutamakan pembangunan ekonominya yang kaya sumberdaya. Setelah kekacauan pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Sukarno, baik negara-negara Barat maupun negara-negara tetangganya memandang perubahan di Indonesia secara positif. Selain itu, status Indonesia sebagai negara pendiri Gerakan Non-Blok^{*} membuat Indonesia dapat menggalang dukungan yang besar dari kelompok negara-negara ini. Selain itu Indonesia adalah juga negara terbesar dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan dapat mengandalkan dukungan sebagian besar negara-negara Islam. Dukungan luas bagi Indonesia adalah salah satu faktor bagi tidak adanya upaya serius untuk mencegah tindakan-tindakan agresifnya di Timor Portugis, termasuk dalam forum PBB.

56. Walaupun secara resmi nonblok, rezim Soeharto yang antikomunis berarti bahwa Indonesia lebih condong ke kubu Barat yang menawarkan kesempatan perdagangan dan investasi yang besar.⁵⁰ Rezim Orde Baru Presiden Soeharto telah membuktikan citra antikomunismenya kepada Amerika Serikat dengan memberantas Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah kekacauan pada 1965 - 1966. Pada tahun-tahun itu, ABRI memimpin dalam penumpasan PKI, membunuh sampai satu juta anggota dan pendukungnya, dan memenjarakan lebih daripada satu juta orang lainnya.⁵¹ Orde Baru melarang Komunisme, membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina, dan mengukuhkan diri dengan mantap di kubu Barat. Indonesia mengupayakan investasi dan bantuan ekonomi dari teman-teman Baratnya.

57. Selain menempatkan dirinya dengan Blok Barat, Indonesia juga memperbaiki hubungannya dengan negara-negara antikomunis di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Pada 1967, Indonesia bergabung dengan negara-negara ini untuk membentuk Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), untuk memerangi penyebaran Komunisme di kawasan tersebut, khususnya dari Vietnam Utara dan Republik Rakyat Cina. Indonesia takut bahwa komunisme akan menyusup ke negaranya dan membangkitkan kembali unsur-unsur komunisme yang laten. Karena itu, bahkan dengan semakin meningkatnya tekanan

* Gerakan Non-Blok terdiri atas lebih daripada 100 negara yang menganggap diri mereka tidak beraliansi dengan blok kekuatan utama, yang dalam konteks perang dingin pada saat pendiriannya berarti blok kapitalis dan komunis. Indonesia menjadi tuan rumah pendiriannya pada 1955.

internasional, Soeharto belum siap untuk membebaskan ratusan ribu tahanan yang ditangkap menyusul kudeta 1965.

58. Dalam dasawarsa sejak 1965, Orde Baru tidak pernah surut dalam semangat antikomunismenya di dalam negeri. Selama 1965 – 1966, antara 250 ribu dan satu juta anggota dan pengikut PKI terbunuh, dan satu juta orang lainnya atau lebih dipenjarakan. Namun, antikomunisme memang merupakan unsur penting tetapi bukan satu-satunya tolok ukur loyalitas dalam rezim tersebut. Di bawah Orde Baru Soeharto, batasan perdebatan politik menjadi sangat sempit, dan didefinisikan tidak hanya oleh perasaan antikomunisme rezim tersebut, tetapi juga oleh ketidaksukaannya kepada politik pluralis pada umumnya. Berbagai aturan baru ditetapkan oleh struktur otoriter yang didominasi oleh militer.⁵² Pada masa ketika persepsi Barat mengenai Asia Tenggara dicirikan oleh ketakutan bahwa negara-negara lainnya di wilayah tersebut adalah bagaikan sederetan domino yang berisiko mengikuti contoh Indocina dan jatuh ke kubu Komunis, pihak Barat bersedia mengabaikan represi yang menjadi andalan Orde Baru, asalkan Indonesia terus menjadi benteng dalam mencegah penyebaran komunisme.

59. Banyak negara Barat dan sekutunya di Asia berpandangan sama seperti Soeharto bahwa Timor Portugis sebaiknya disatukan dengan Indonesia, baik karena mereka memiliki asumsi strategis yang sama dan pola pikir antikomunisme yang mendasarinya, maupun hanya karena mereka tidak ingin mengasingkan Jakarta. Pola pikir ini terangkum dalam saran dari Duta Besar Inggris, Sir Archibald Ford, ke London:

Bahkan tanpa intervensi Soviet atau Cina, wilayah tersebut dapat menjadi “anak bermasalah” [di kawasan ini]... Bagi Inggris, lebih baik jika Indonesia mengintegrasikan wilayah tersebut... Dan jika ada krisis dan perdebatan di PBB, kita semua harus diam dan tidak mengambil posisi yang menentang Indonesia.⁵³

60. Indonesia juga dapat mengandalkan dukungan negara-negara Asia yang nonkomunis. Walaupun terdapat perbedaan dalam tingkat dukungan yang siap mereka berikan, anggota-anggota ASEAN siap memberikan dukungan luas kepada Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Di dalam ASEAN sendiri terdapat bermacam pandangan mengenai kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis, mulai dari pandangan Singapura, yang sebagai negara pulau kecil dengan budaya tersendiri memandang dirinya seperti Israel di Asia Tenggara dan ragu mengenai niat Indonesia, sampai Malaysia, yang menjadi pendukung terbesar Jakarta.

61. Persekutuan dalam Perang Dingin bukan satu-satunya alasan mengapa berbagai negara di kawasan tersebut mendukung Indonesia. Jepang memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Indonesia, dan menjadi semakin bergantung pada minyak dan gas alam Indonesia untuk mendorong ekonomi Jepang yang tengah berkembang pesat. Kebijakan Australia mengenai Timor Portugis didasarkan pada keinginannya untuk membentuk kembali kebijakan luar negerinya secara keseluruhan dengan

memberi warna regional dan khususnya memperbaiki hubungannya dengan Indonesia. Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, berpandangan sama dengan Indonesia bahwa Timor-Leste yang merdeka bukanlah opsi yang baik dan diberi tahu bahwa aneksasi Timor Portugis sudah menjadi kebijakan Indonesia yang “tetap”. Apapun niat dia sebenarnya, dalam kedua pertemuannya dengan Presiden Soeharto pada 1974 - 1975, Whitlam memberi Presiden Soeharto kesan yang kuat bahwa ia melihat perlunya pengambilalihan oleh Indonesia, bahkan meski mengakui pentingnya menegaskan prinsip penentuan nasib sendiri.

Kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis

62. Selama tahun-tahun awal pembentukan negara Indonesia, sejumlah orang nasionalis Indonesia memimpikan terciptanya Indonesia Raya seperti yang pernah dicapai pada masa keemasan ketika Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menguasai kawasan kepulauan ini. Walau tidak ada dasar historisnya, Indonesia Raya akan mencakup wilayah Malaysia dan Filipina, serta Timor Portugis. Republik Indonesia tidak pernah bermaksud untuk mewujudkan Indonesia Raya. Justru sebaliknya, ketika hendak menggalang pengakuan internasional di akhir dasawarsa 1940-an dan kemudian pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, ketika mencoba mengklaim Irian Barat (kemudian Irian Jaya, kini Papua), Indonesia menyatakan bahwa batas-batas negaranya adalah batas-batas Hindia Belanda. Alasannya pragmatis: mengklaim kedaulatan atas Indonesia Raya akan berkesan ekspansionis di dunia yang mengakui bahwa negara-negara merdeka harus mewarisi batas-batas yang telah ditetapkan oleh penguasa kolonialnya.

63. Khusus untuk Timor Portugis, sebelum 1975, Indonesia tidak pernah mengklaim bahwa ia memiliki hak untuk menggabungkan Timor Portugis. Pada 1961, ketika Indonesia mengupayakan klaim atas Irian Barat, Menteri Luar Negeri ketika itu, Soebandrio, secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki klaim atas Timor Portugis karena itu merupakan wilayah Portugal sehingga bukan milik Indonesia.⁵⁴ Pada 1974, setelah bertemu dengan utusan luar negeri ASDT, José Ramos-Horta, Menteri Luar Negeri Indonesia ketika itu, Adam Malik, menulis kepada Ramos-Horta:

Pemerintah dan juga rakyat Indonesia tidak memiliki niat untuk menambah atau memperluas wilayah mereka, atau untuk menduduki wilayah-wilayah selain yang tercantum dalam Konstitusi mereka. Penegasan kembali ini untuk memberi Anda gambaran yang jelas, sehingga tidak ada keraguan dalam pikiran rakyat Timor dalam mengungkapkan keinginan mereka sendiri... Oleh karena itu, siapapun yang akan memerintah di Timor di masa depan setelah kemerdekaan, dapat dipastikan bahwa Pemerintah Indonesia selalu akan berusaha untuk memelihara hubungan baik, persahabatan, dan kerjasama demi manfaat kedua negara.⁵⁵

64. Walaupun tidak pernah menjadi gagasan arus utama, anggapan bahwa Timor Portugis adalah milik Indonesia karena alasan historis, geografis, dan etnis, tetap hidup sebagai arus bawah dalam pembicaraan politik di Indonesia, yang dapat sewaktu-waktu dimunculkan bila diperlukan. Ancaman penyatuan dan integrasi Timor Portugis dengan Indonesia selalu membayangi hubungan Indonesia dengan Timor Portugis. Gubernur-gubernur Timor Portugis pascaperang selalu mencurigai niat Indonesia, dan senantiasa berusaha membatasi kontak antara kedua belahan pulau tersebut. Walaupun tingkat keterlibatan Indonesia dalam pemberontakan 1959 masih dipertentangkan (lihat 3.1, di atas), represi yang terjadi setelahnya dan analisis pemerintahan Timor Portugis mengenai asal-usul pemberontakan tersebut, menunjukkan bagaimana seriusnya pihak Portugis berpikir bahwa Indonesia memiliki rencana bagi wilayah tersebut. Indonesia bukannya tidak mengacuhkan ketakutan-ketakutan tersebut. Pada Juli 1961, contohnya, dalam sebuah pidato yang mengingatkan Portugal untuk tidak mengabaikan dukungan internasional atas kemerdekaan Angola, Menteri Luar Negeri Indonesia ketika itu, Soebandrio, mengingatkan pendengarnya dengan nada ancaman mengenai kedekatan Indonesia dengan Timor Portugis.⁵⁶ Pada 1962, sebuah laporan (Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi) mencatat bahwa sebuah “Biro Pembebasan Republik Timor” telah dibentuk di Jakarta. Sekitar Mei - Juni 1963 Biro tersebut mengumumkan bahwa Biro ini telah membentuk pemerintahan dengan 12 menteri di Batugade.⁵⁷ Pada September 1963, Menteri Penerangan Indonesia, Ruslan Abdulgani menyatakan:

walaupun kami bukanlah negara ekspansionis, kami tidak dapat membiarkan bangsa yang nenek moyangnya sama dengan kami ditindas dan dipenjara hanya karena mereka ingin bergabung dengan tanah air nenek moyang mereka.*

65. Walau demikian, integrasi Timor Portugis tidak pernah menjadi tujuan dari kebijakan resmi di bawah Presiden Sukarno. Berbagai pernyataan dan infiltrasi yang sesekali muncul, tidak pernah sampai menjadi komitmen serius untuk menggabungkan Timor Portugis karena Indonesia tidak pernah memandang koloni tersebut sebagai ancaman. Indonesia menjaga hubungan yang stabil dengan pemerintahan Salazar: Ia membuka konsulatnya di Dili dan Sukarno sendiri mengunjungi Portugal pada 1959.

66. Sampai 1974 penerus Sukarno, Soeharto, tidak pernah melenceng dari posisi pendahulunya, namun, setelah Revolusi Anyelir, berbagai argumen “kembali ke pangkuan ibu pertiwi” untuk mengambil alih Timor Portugis mulai muncul. Tokoh-tokoh politik Timor-Leste mengingat di hadapan Komisi kekhawatiran mereka saat pidato John Naro, wakil ketua DPR-RI, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki klaim historis atas Timor Portugis.⁵⁸ Orang-orang yang mendekati masalah ini dari

* James Dunn, *East Timor: A rough passage to independence*, Longueville, 2003, hal. 87. Juga perlu dicatat, peneliti CSIS, Harry Tjan Silalahi menyebut bahwa Indonesia menyelenggarakan operasi klandestin di Timor Portugis selama “konfrontasi”, dalam suatu pembicaraan dengan staf Kedutaan Australia di Jakarta, 2 Juli 1974. Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor 1974-1976*, 2000, hal. 62, dokumen 12.

sisi strategis melihat pentingnya pandangan-pandangan ini. Dalam wawancara mereka dengan Komisi, Jusuf Wanandi dan Harry Tjan Silalahi, dari *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), yang keduanya sangat terlibat dalam mengembangkan kebijakan tentang Timor Portugis pada 1974 - 1975 atas nama mentor mereka Jenderal Ali Moertopo, keduanya menyebutkan kuatnya pandangan-pandangan seperti ini.⁵⁹ Kolonel Aloysius Sugianto, seorang anggota seksi operasi khusus Jenderal Ali Moertopo dalam badan intelijen, Bakin, yang memainkan peran penting dalam berbagai kegiatan rahasia awal di Timor Portugis 1974 - 1975, mengatakan kepada Komisi bahwa ia melihat dirinya bekerja untuk menyatukan kembali bangsa yang terpecah akibat kolonialisme.

*Kalau kita begitu. Apodeti itu landasannya selalu, kita ini satu saudara, satu pulau. Kita jadi pecah, jadi dua antara Timor Dili sama Timor Kupang. Itu karena penjajah. Mereka itu, kalau kita lihat, benar kan? Karena penjajah jadi pecah. Di sana menjadi daerah Portugal, di sini daerah Belanda. Sebetulnya solusi kita satu. Logika itu benar, cara berpikir rakyat itu benar.*⁵⁹

67. Setelah invasi Timor-Leste, pejabat-pejabat Indonesia menghidupkan kembali argumen historis (dan etnis) bagi integrasi. Dalam pidatonya di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 Desember 1975, enam hari sesudah invasi Dili dan sepuluh hari setelah ia menyangkal mengenai ambisi teritorial Indonesia di Timor Portugis, Duta Besar Indonesia untuk PBB Anwar Sani menyatakan:

Perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan mengapa Indonesia sangat peduli akan apa yang terjadi di Timor Portugis. Timor Portugis adalah bagian dari Pulau Timor, bagian lain dari pulau tersebut adalah wilayah Indonesia. Timor terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia, satu dari ribuan pulau yang membentuk kepulauan. Penduduk Timor Portugis... berasal dari etnis yang sama dengan penduduk yang berada di wilayah Indonesia. Pemisahan selama 450 tahun karena dominasi kolonial tidak menghapuskan ikatan erat darah dan kultur antara penduduk wilayah ini dan kerabat mereka di Timor Indonesia. Kedekatan geografis dan kekerabatan etnis adalah alasan-alasan penting mengapa Indonesia sangat peduli dengan keamanan dan stabilitas di Timor Portugis, tidak hanya karena kepentingan Indonesia sendiri tetapi juga untuk kepentingan seluruh wilayah Asia Tenggara.⁶⁰

* Jusuf Wanandi menyatakan bahwa "dalam lingkaran tertentu" Timor-Leste dilihat sebagai 'wilayah irredentist'. 'Irredentism' adalah gerakan yang berusaha menyatukan kembali wilayah-wilayah yang terpisahkan. [Wawancara CAVR dengan Jusuf Wanandi, Jakarta, CSIS, Jakarta, 24 Juli 2003.] Harry Tjan Silalahi mengamati: Saya pikir teori yang menyatakan bahwa Timor-Leste adalah bagian integral dari Indonesia memang ada, tanpa secara eksplisit dinyatakan, sejak masa Sukarno, setelah pembebasan Irian. [Wawancara CAVR dengan Harry Tjan Silalahi, Jakarta.]

68. Yang lebih kuat dalam pemikiran Indonesia, selain alasan historis, adalah alasan-alasan strategis bagi penggabungan. Menurut James Dunn, mengutip sumber-sumber Indonesia, “kelompok Bakin/Opsus melihat kembali posisi mereka pada akhir 1972 atau 1973 dan berkesimpulan bahwa mereka sangat menentang ide Timor-Leste merdeka”, yang dapat “menambah dimensi baru bagi persoalan keamanan Indonesia”⁶¹ Buku setengah resmi, *Integrasi*, mengklaim bahwa kepentingan Indonesia di Timor Portugis sudah ada jauh sebelum komitmen Portugal kepada dekolonisasi. Buku tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia mengambil pendekatan evolusioner, yang pada tahap awalnya akan membangkitkan keinginan rakyat Timor untuk merdeka. Yang melatari kebijakan Indonesia tersebut adalah perlunya menjamin “bahwa Timor-Leste tidak akan menjadi ‘tempat bermasalah’ dan dengan demikian tidak akan digunakan sebagai *alat tawar-menawar* melawan Indonesia.”⁶²

69. Setelah Revolusi Anyelir di Portugal pada April 1974, pendekatan strategis, yang dibentuk oleh rasa antikomunisme yang mendalam dari rezim Orde Baru, dengan cepat mendominasi pemikiran mengenai persoalan Timor Portugis di antara kalangan elite Indonesia. Pendekatan ini bersumber dari ketakutan bahwa Timor-Leste yang merdeka akan menjadi basis bagi infiltrasi oleh negara-negara komunis ke Indonesia. Pandangan ini sudah muncul setidaknya sejak 22 Mei 1974, ketika anggota Bakin mengatakan kepada Kedutaan Australia di Jakarta mengenai pandangan berikut ini: “Indonesia sudah mengatasi Cina di pintu depannya dan mungkin sekarang harus menangani ancaman dari pintu belakangnya.”⁶³

70. Soeharto sendiri juga mengambil pandangan strategis ini. Pada pertemuannya dengan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam di Wonosobo dekat Yogyakarta pada September 1974, ia menyebut Cina dan Uni Soviet sebagai negara-negara yang mungkin akan mencampuri Timor Portugis.⁶⁴ Dalam pertemuan keduanya di Townsville, Queensland, pada April 1975, Soeharto mengatakan kepada Whitlam bahwa intelijen Indonesia telah mendapat informasi bahwa orang-orang komunis dari Cina sedang berupaya masuk ke Timor Portugis melalui Australia dengan bantuan Kedutaan Cina di Canberra.⁶⁵ Pejabat Indonesia tidak semuanya sepaham mengenai sifat ancaman komunisme ini. Kepala intelijen di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan wakil ketua Bakin, Letnan Jenderal Benny Moerdani meyakini bahwa armada Soviet adalah ancaman utamanya: Ia memprediksi bahwa Timor merdeka akan memberi Uni Soviet pangkalan Angkatan Laut yang akan memungkinkan Soviet membagi wilayah laut Indonesia menjadi dua zona.⁶⁵ Direktur eksekutif CSIS Jusuf Wanandi mengatakan kepada Komisi bahwa orang lainnya lebih khawatir tentang maksud Vietnam: mereka berargumen bahwa kalau Kuba dapat mengirimkan pasukannya ke Angola yang jaraknya 2.000 km jauhnya dari pangkalan mereka, kenapa Vietnam tidak bisa mengirimkan pasukannya ke Timor-Leste?⁶⁶ Perbedaan penilaian mengenai ancaman komunis ini seharusnya dapat memicu negara-negara luar untuk mempertanyakan kebenaran argumen tersebut.

.....
* Lihat Dokumen 123 di DFAT, *Australia and the Indonesian Incorporation of East Timor*, hal. 248. Whitlam mengatakan bahwa Indonesia tidak punya bukti mengenai ini.

Proses dekolonisasi dan partai-partai politik

Tinjauan

71. Revolusi Anyelir seketika mengubah situasi percaturan politik di Timor Portugis, yang sampai saat itu belum memiliki partai politik aktif dan hanya sedikit kegiatan antikolonial. Dengan hukum-hukum baru untuk perserikatan politik, partai-partai cepat terbentuk. Dua partai muncul sebagai kelompok dominan, UDT dan ASDT. Landasan kedua partai tersebut menyerukan kemerdekaan sebagai hasil akhir dari proses dekolonisasi. Mereka berbeda dalam laju dekolonisasi tersebut, dengan ASDT menghendaki kemerdekaan segera, sementara UDT yang lebih konservatif ingin sebuah proses yang lebih bertahap. Namun yang benar-benar memisahkan kedua partai sentris ini, adalah ideologi militan di kedua ekstrem yang saling menuduh, sebagai “fasis” atau “komunis”. Partai ketiga, Apodeti, mendapatkan dukungan di sana-sini, namun jumlah pendukungnya berada jauh di bawah kedua partai utama, dan ciri utamanya adalah posisinya yang prointegrasi dan dukungan Indonesia yang mereka raih.

72. Kampanye politik dengan cepat berubah menjadi serangan verbal dan terkadang fisik, dan kedua partai utama tidak melakukan banyak untuk mengendalikan ini. Kedua partai menggunakan siaran radio untuk menyebarkan propaganda dan serangan pribadi satu sama lain, sehingga meningkatkan ketegangan sosial. Tidak adanya pengalaman politik ini dimanfaatkan oleh agen-agen Indonesia, termasuk anggota dinas intelijen yang melakukan operasi terselubung di dalam Timor Portugis. Mereka berupaya memecah-belah orang Timor untuk mencapai integrasi dengan Indonesia. Hal ini memicu pihak-pihak militan di kedua partai, dan memuncak pada kegagalan kedua partai menemukan cara untuk bekerja bersama bagi kepentingan nasional. Hasilnya adalah pecahnya koalisi yang berusia empat bulan antara UDT dan Fretilin pada akhir Mei 1975. Dari situ, ketegangan antara kedua partai meningkat sampai UDT melancarkan aksi bersenjata yang terkoordinasi di seluruh wilayah, yang kemudian berubah menjadi konflik bersenjata berdarah. Fretilin menanggapi juga dengan kekerasan.

Permulaan kesadaran politik

73. Sistem kolonial Portugis menafikan hak orang Timor-Leste untuk bersuara dalam menentukan urusan mereka sendiri. Namun, penyebaran pendidikan yang bertahap setelah Perang Dunia Kedua mulai menumbuhkan pemikiran kritis mengenai sistem kolonial yang ciri utamanya adalah keterbelakangan ekonomi, korupsi, tingkat pengangguran yang tinggi, diskriminasi rasial, dan kekejaman. Penderitaan orang Timor-Leste mulai mendapatkan penyaluran lewat kalangan terdidik.

74. Direnggut hak suaranya dan belajar dari pemberontakan Viqueque 1959 tentang harga yang harus dibayar dalam konfrontasi langsung dengan sistem kolonial, pada awal 1970-an kalangan yang sadar politik mengadopsi pendekatan politik baru yang lebih berhati-hati dan rahasia. Pada 1970, kalangan generasi muda terdidik memulai sebuah kelompok diskusi antikolonial, yang di antara anggotanya terdapat Mari

Alkatiri, José Ramos-Horta, Nicolau Lobato, Justino Mota, dan Francisco Borja da Costa. Sebuah kelompok antikelonial kecil dibentuk pada 1967 yang berfungsi pada masa Revolusi Anyelir, diorganisasi dalam berbagai kelompok kecil yang berjalan tanpa saling mengetahui. Kelompok ini tampaknya tidak memiliki dampak politik yang besar.⁶⁷

75. Pada awal 1970-an, orang Timor mulai diperbolehkan untuk menulis tentang topik-topik yang terbatas dan dengan kebebasan ekspresi yang dibatasi. *Seara*, majalah yang diterbitkan oleh Dioses Dili, menjadi sarana pengungkapan pendapat yang penting setelah Pastor Martinho da Costa Lopes mengambil alih redaksi pada September 1972. Mari Alkatiri, José Ramos-Horta, Nicolau Lobato, Abílio Araújo, dan Francisco Xavier do Amaral semuanya menulis artikel untuk *Seara* mengenai permasalahan sosial di bawah redaksi Pastor Martinho da Costa Lopes.

76. Pemerintah tidak ragu-ragu untuk menekan segala tanda pembangkangan. Pada 1970, José Ramos-Horta diasingkan ke Mozambik selama dua tahun setelah DGS* melaporkan Ramos-Horta mengatakan kepada seorang turis Amerika bahwa kalau Portugal tidak sanggup membangun Timor, lebih baik Amerika mengambil alih koloni ini.⁶⁸ Sejumlah artikel oleh Amaral dan Ramos-Horta—dalam kasus Ramos-Horta adalah sebuah esai berjudul “*Maubere Meu Irmão*” (“Maubere Saudaraku”) dianggap sangat menghina—menarik perhatian pemerintah. Di bawah tekanan pemerintah, *Seara* mengumumkan, tanpa penjelasan, dalam edisi 24 Maret 1973 bahwa majalah tersebut akan tutup.[†]

77. Pada 1973, di Dili terjadi kerusuhan antara pemuda dan militer Portugis.⁶⁹ Terjadi ketegangan, dan tidak lama kemudian kegalauan generasi muda dapat menemukan bentuk yang lebih jelas.

Susunan partai-partai politik

78. Begitu Revolusi Anyelir menghilangkan larangan ekspresi politik, kalangan terdidik Timor dengan cepat mengambil kesempatan untuk terjun ke kancah politik. Sementara komposisi kelas, etnis, dan kedaerahan sulit dijelaskan secara sederhana, terdapat berbagai pola latar belakang orang-orang yang ikut masuk ke dalam partai. Para pemimpin Timor dari berbagai partai umumnya saling mengenal dengan baik dan terkadang berhubungan keluarga. Domingos de Oliveira, Sekretaris Jenderal partai UDT ketika itu, mengatakan kepada Komisi mengenai kedekatannya dengan Wakil Presiden Fretilin, Nicolau Lobato, dan bagaimana ia sering berbincang mengenai politik dengan sepupunya, José Osorio Soares, Sekretaris Jenderal Apodeti. Timor-Leste 1975 merupakan dunia kecil yang terdiri atas jaringan dan aliansi politik.⁷⁰

* PIDE berubah nama menjadi DGS (Direcção Geral de Segurança) pada 1968.

† Ramos-Horta menuliskan bahwa ia dipanggil lagi oleh gubernur karena kata-kata “Maubere Saudaraku”, tetapi tidak terlalu jelas bagaimana pikiran pemerintahan Portugis terhadap tulisan Xavier do Amaral pada saat itu. Tapi ini diterima banyak kalangan nasionalis bahwa *Seara* ditutup karena tulisan Xavier do Amaral. Lihat Abílio Araújo, *Timor-Leste: Os Loricos Vontaram a Cantar*, 1977, Lisabon, hal. 187.

79. Latar belakang yang terpendang adalah sesuatu yang umum di kalangan pemimpin partai. Menjadi terpendang pada ujung masa kolonial di Timor Portugis dapat berarti beberapa hal: latar belakang *liurai*, keturunan ras campuran (*mestizo*), keluarga tuan tanah, pendidikan menengah di gereja atau sekolah negeri. Sering orang-orang yang memiliki ciri seperti ini bekerja sebagai pegawai negeri. Karakteristik seperti ini mempersatukan banyak pemimpin partai. Mereka sering hanya bisa dibedakan dengan gradasi sosial yang lebih halus lagi. Tidak mengherankan, bila melihat landasan politik federalisnya, beberapa pemimpin UDT mempunyai kedudukan kuat dalam sistem kolonial, baik karena memegang jabatan yang cukup senior di pemerintahan sipil, melalui keanggotaan *Acção Nacional Popular* (ANP) yang Salazaris, atau melalui kedekatan mereka dengan Gereja Portugis.⁷¹ Walaupun sering memiliki latar belakang yang serupa, para pemimpin Fretilin tidak memiliki keterikatan emosional kepada rezim kolonial Portugal. Apodeti mendapatkan kepemimpinan mereka dari wilayah-wilayah tertentu yang memiliki hubungan dengan Indonesia yang bisa saja bersifat geografis (berdasarkan kedekatannya dengan perbatasan Indonesia) atau politis (berhubungan dengan keterlibatan mereka dalam pemberontakan Viqueque 1959).

80. Penguasa tradisional Timor-Leste menyediakan jalur penting untuk menggalang kekuatan secara lokal bagi semua partai. Partai KOTA yang kecil bermaksud untuk menjadikan sistem tradisional ini sebagai basis programnya. Apodeti juga menggalang dukungan dari pemimpin tradisional dan regional ini, dan cukup berhasil. Guilherme Gonçalves, *liurai* Atsabe, memberi basis dukungan regional yang cukup besar bagi partai ini di daerah perbatasan dengan Indonesia. Namun, para *liurai* tidak memberikan basis tunggal yang kuat bagi satu partai manapun. Francisco Xavier do Amaral menjelaskan kepada Komisi tentang perbedaan-perbedaan antara cara Fretilin dengan UDT di dalam mencari dukungan masyarakat:

*Partai ASDT memiliki metode ini. Kita bisa melihat bahwa partai pertama yang dibentuk ialah UDT, dan saya lihat taktik mereka. UDT berkampanye dengan fokus kepada administrator, dan mendekati administrator subdistrik dan penguasa lokal [liurai]. Mereka tidak secara langsung mendekati rakyat. Jadi saya pikir, kita butuh rakyat, saya tidak butuh liurai, mereka mendukung Portugis. Saya butuh rakyat. Jadi mereka berangkat dari atas ke bawah, sedangkan saya memulai dari bawah. Saya memulai dari akarrumput kemudian ke atas. Terkadang, kami bertemu di tengah-tengah.*⁷²

81. Partisipasi politik dalam suatu tradisi demokrasi Barat yang individualistis tetap menjadi hak khusus segelintir kalangan elite yang membentuk partai-partai tersebut. Proses politik yang terjadi setelah Revolusi Anyelir berjalan cepat, dan tanpa pendidikan kewarganegaraan atau politik, banyak orang Timor biasa yang membuat pilihan keanggotaan atau afiliasi partai berdasarkan kesetiaan lokal atau karena ikut-ikutan ketimbang karena prinsip atau kebijakan partai.⁷³ Desa-desa atau wilayah-wilayah tertentu sering setia terhadap satu partai saja. Mario Carrascalão dari UDT menjelaskan bagaimana kesetiaan politik suatu komunitas terbentuk:

Orang-orang di Maubisse, karena mereka dekat dengan tentara-tentara Portugis, maka seluruh Maubisse adalah UDT. Hampir semua orang Maubisse adalah UDT. Tetapi jika Anda melihat Uatolari, semua orang adalah Fretilin, dan di Uato Carbau semua orang adalah Apodeti. Ini adalah kenyataan yang terjadi ketika kami mempersiapkan pemilihan-pemilihan [di desa] [pada 1975].⁷⁴

Perkembangan dan ketegangan internal

Kompetisi antara UDT dan Fretilin

82. Tidak diragukan lagi bahwa dua partai terbesar adalah UDT dan ASDT. Apodeti menjadi penting karena hubungan dengan dan dukungannya dari pemerintah Indonesia. Sementara UDT dan ASDT memiliki perbedaan, dalam tujuan akhir kemerdekaannya mereka sama. Dan memang selama 1974 -1975 mengenai persoalan kemerdekaan, UDT dan Fretilin bergerak semakin dekat dan keduanya pada akhirnya menerima jadwal waktu yang diajukan Portugal yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7/75 pada 17 Juli 1975.⁷⁵ ASDT mulai membicarakan untuk membentuk sebuah front yang berbasis luas sejak Juli 1974, namun menolak gagasan membentuk koalisi dengan UDT.⁷⁶ Pada Agustus, pendukung UDT dan ASDT menyelenggarakan serangkaian pertemuan untuk membentuk koalisi, namun sekali lagi gagal menyetujui landasan bersama.⁷⁷ Kedua partai dengan cepat tenggelam ke dalam serangan verbal terhadap yang lainnya dan retorika agresif yang memecah-belah secara sosial dan menciptakan landasan bagi kekerasan yang segera menyusul.⁷⁸

Pelatihan militer Apodeti di Timor Barat

83. Sementara itu Apodeti menjalin kontak dengan militer Indonesia untuk mendapatkan senjata dan pelatihan militer. Utusan Apodeti, Tomas Gonçalves, anak *liurai* Atsabe, Guilherme Gonçalves, pergi ke Timor Barat pada Agustus 1974 untuk pelatihan militer. Pada September, ia pergi ke Jakarta, tempat ia bertemu dengan panglima ABRI, Jenderal Maraden Panggabean, yang ketika itu melihat Apodeti sebagai alat yang tepat untuk mencapai hasil integrasi. Kunjungan-kunjungan ini terjadi dengan keterlibatan dan bantuan konsulat Indonesia di Dili.⁷⁹

Partai-partai politik bersiap menghadapi konfrontasi bersenjata

84. Apodeti merupakan partai pertama, namun bukan satu-satunya, yang mengembangkan kemampuan paramiliter. Ini merupakan kecenderungan kuat di antara ketiga partai. UDT dan Fretilin secara aktif mengincar dukungan di kalangan orang Timor yang menjadi anggota tentara kolonial Portugal.⁸⁰ Di samping persoalan kesetiaan kepada Portugal, Gubernur Mário Lemos Pires juga khawatir tentang

prospek terjadinya perpecahan di antara pasukan Timor-Leste yang didasarkan pada kesetiaan terhadap partai politik. Mantan perwira tingkat menengah (*aspirante*), Rogério Lobato, belakangan mengenang:

Dapat saya katakan bahwa UDT membuat kampanye untuk memperoleh dukungan terutama dari lulusan sekolah militer, para sersan. Namun Fretilin juga membuat kampanye terbuka ... di antara pasukan-pasukan tersebut untuk memobilisasi para serdadu.⁸¹

85. Ini menjadi kekhawatiran pemerintah kolonial. Ketika Fretilin mendeklarasikan pasukan Timor sebagai bagian dari koalisi UDT – Fretilin, Mayor Francisco Mota, Kepala Kantor Urusan Politik Gubernur, melarang militer terlibat dalam politik, sesuai tradisi militer Portugis untuk berada di luar politik (*apartidarismo*).⁸² Namun, pada April 1974, tentara Portugis sendiri baru memberi contoh mengenai keterlibatan militer dalam politik. Banyak serdadu Timor dalam tentara dan polisi kolonial Portugis bingung oleh apa yang mereka pandang sebagai ketiadaan disiplin dan kesetiaan pada tugas yang diperlihatkan oleh orang Portugis dalam tentara kolonial setelah Revolusi Anyelir.⁸³ Walaupun sudah terjadi kegaduhan sebelum 11 Agustus, tentara Timor umumnya tetap loyal kepada prinsip *apartidarismo* sampai pecah perang saudara. Beberapa orang bahkan terus menolak untuk berpihak setelah itu.

Mahasiswa dari Portugal

86. Sumber lain bagi ketegangan di masa itu, dan juga yang merupakan bahan pembicaraan semenjak itu, adalah peran tujuh orang mahasiswa Timor yang baru kembali dari Portugal pada September 1974, beberapa hari sebelum ASDT mengganti namanya menjadi Fretilin. Mereka membawa pengalaman politik radikal mereka dari kelompok-kelompok mahasiswa di Lisabon[†] dan sikap antikolonial yang keras.⁸⁴ Sementara beberapa politikus Timor dari masa itu yakin bahwa para mahasiswa tersebut bertanggung jawab mendorong ASDT menjadi partai yang lebih revolusioner,⁸⁵ Komisi mendengar kesaksian dari anggota Komite Sentral Fretilin Mari Alkatiri bahwa ketika mereka kembali ke Timor, para mahasiswa, tidak seperti anggota Komite Sentral, memandang kolonialisme Portugis sebagai ancaman yang lebih besar daripada neokolonialisme Indonesia.⁸⁶ Para mahasiswa tersebut bergabung dengan Fretilin, yang mampu meredam beberapa gagasan mereka yang lebih radikal,⁸⁷ dan partai tersebut kemudian terpengaruh oleh semangat dan gagasan baru mereka. Para mahasiswa ini menjadi anggota Fretilin yang menonjol. Sementara peran mereka dalam pembentukan Fretilin dan radikalisasi kebijakan partai tersebut masih dipertentangkan, para anggota UDT mengingat pengaruh

* Lima mahasiswa tersebut adalah Abílio Araújo, Guilhermina Araújo, António Carvarinho, Vicente Manuel Reis, dan Venâncio Gomes da Silva. Relatório da CAEPDT, hal. 54.

† Mereka termasuk MLTD atau Movimento Libertação Timor Dili dan FULINTIDI atau Frente Unica de Libertação de Timor Dili.

mereka yang memanas-manasi melalui grafiti (“Matilah Fasis!”)⁸⁸ dan hinaan tentang UDT yang dituduh konservatif.⁸⁹ Perilaku seperti ini membuat para mahasiswa ini dipersalahkan atas kebijakan-kebijakan Fretilin yang lebih radikal.

ASDT menjadi Fretilin

87. Pada 11 September 1974, ASDT mengubah namanya menjadi *Frente Revolucionário de Timor-Leste Independente*, Fretilin (Front Revolusioner bagi Timor-Leste Merdeka). Sejak saat itu partai ini mengambil sikap yang lebih radikal. Manifestonya, *Manual e Programa Políticos da Fretilin*, menyebut Fretilin sebagai “front yang mempersatukan kelompok-kelompok nasionalis dan antikolonialis di bawah satu visi—pembebasan bangsa Timor dari kolonialisme”.⁹⁰ Manifesto tersebut juga menegaskan bahwa Fretilin merupakan “satu-satunya wakil sah” rakyat Timor. Tidak ada dasar elektoral bagi klaim ini, yang oleh Fretilin didasarkan pada kesetiiaannya kepada mayoritas rakyat pribumi Timor yang agraris. Walau demikian, berdasarkan nilai-nilai yang diklaimnya dimiliki oleh “seluruh orang Timor-Leste,” Fretilin menuntut kemerdekaan Timor-Leste secara *de jure* dari Portugal. Di satu sisi, Fretilin berupaya untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahnya Portugal. Di sisi lain, beberapa pemimpinnya ketika itu melihat kekuatan neokolonial Indonesia sebagai ancaman yang lebih besar dan bermaksud untuk membangun front nasional yang luas untuk menghadapi ancaman ini.⁹¹

88. Peran sebagai satu-satunya wakil rakyat Timor-Leste yang diproklamasikan secara sepihak oleh Fretilin membuat khawatir pemimpin-pemimpin partai lain, yang menganggap hal ini memicu rasa tidak toleran dalam politik.

*Mereka tidak menerima partai-partai lain. Mengapa?... Inilah yang mereka inginkan, yaitu menjadi satu-satunya perwakilan rakyat Timor yang sah. Mereka tidak mengenali orang-orang di partai lain...*⁹²

Istilah ‘Maubere’

89. Walau bermaksud menjadi wakil tunggal bangsa Timor-Leste, Fretilin tidak mencapai hal ini. Yang dicapai oleh Fretilin adalah pengembangan nasionalisme Timor-Leste dengan menggunakan gagasan-gagasan seperti menjadikan istilah ‘Maubere’ sebagai simbol rakyat Timor biasa, dan slogan dalam bahasa Tetum, “*Ukun Rasik An*”, yang berarti kebebasan dan pemerintahan sendiri. Ketika pertama kali digunakan pada 1974 - 1975, istilah ‘Maubere’ dipandang oleh orang Timor yang tergabung dengan UDT sebagai memecah-belah ras, karena membedakan orang Timor “berdarah murni” dengan ras campuran, ‘*mestizo*’. Komisi mendengarkan kesaksian dari mantan anggota senior partai UDT, yang menggambarkan istilah ‘Maubere’ sebagai sumber perpecahan penting di masyarakat.⁹³ José Ramos-Horta menjelaskan lahirnya istilah tersebut sebagai slogan politik pada audiensi publik nasional Komisi mengenai Konflik Internal 1974 - 1976:

Saya menulis sebuah artikel di jurnal di Timor [Seara], bukan pada tahun 1975 atau 1974, tetapi tahun 1973...Saat kita membentuk ASDT, dalam sebuah pertemuan ASDT/Fretilin saya jelaskan bahwa semua partai politik perlu mempunyai citra. Jika kita ingin meyakinkan pemilih, kita tidak bisa melakukannya dengan filsafat yang rumit...Jadi saya bilang sebaiknya kita mengidentifikasi Fretilin dengan Maubere sebagai slogan, atau simbol identitas Fretilin. Jelas bahwa 90 persen penduduk Timor tidak memakai alas kaki, tidak punya kartu penduduk, tetapi mereka menganggap diri mereka sebagai Maubere...Kita perlu [memahami] bahwa tidak ada filsafat lain dalam istilah ini. Ini adalah identitas partai.⁹⁴

90. Di tahun-tahun belakangan, selama pendudukan Indonesia, simbol-simbol ini tumbuh menjadi penegasan yang kuat akan aspirasi Timor-Leste untuk merdeka, dan pada saat yang sama terus memecah Fretilin dan UDT.

Fretilin dan ancaman komunisme

91. Terdapat banyak perdebatan mengenai seberapa jauh Fretilin dipengaruhi oleh komunisme pada 1974 - 1975, dan apakah hal ini menjadi alasan sebenarnya bagi aksi bersenjata UDT dan intervensi Indonesia. Komisi mendengar banyak kesaksian mengenai isu ini pada audiensi publik nasional mengenai Konflik Internal tahun 1974 - 1976. Jelas bahwa beberapa anggota Fretilin adalah komunis, tapi tidak benar apabila menyimpulkan berdasarkan hal ini bahwa partai tersebut adalah partai komunis pada 1974 - 1975. Rangkuman yang lebih tepat adalah bahwa arus utama kepemimpinan Fretilin adalah kiri-tengah, walaupun partai ini mencakup serangkaian opini yang bervariasi dari ekstrem-kiri sampai unsur-unsur yang lebih konservatif.

92. Berikut ini adalah pandangan João Carrascalão, pemimpin UDT yang merupakan salah satu pendiri Gerakan Anti-Komunis setelah 11 Agustus:

Dalam tubuh Fretilin, beberapa pemimpin adalah komunis, tetapi Fretilin bukan partai komunis. Dalam tubuh UDT, beberapa pemimpin adalah sosialis, tetapi UDT bukan partai sosialis, UDT adalah partai demokrat sosial...⁹⁵

93. José Ramos-Horta, satu-satunya tokoh politik yang hadir pada pembentukan UDT dan ASDT, juga mengomentari tuduhan bahwa Fretilin adalah partai komunis:

Kalau orang bilang bahwa Fretilin itu komunis pada tahun 1974 - 1975, ini tidak benar. Fretilin adalah front politik. Alarico Fernandes itu orang komunis. [Sebastião] Montalvao orang komunis dan beberapa orang lain yang saya lupa namanya. Nicolau Lobato bukan seorang komunis. Anda bisa menyebut Nicolau Lobato sebagai seorang Marxis Kristen sekuler, seperti teologi pastor Amerika Latin. Para pastor di Brasil, Uskup Brasil, Nikaragua, El Salvador,

semua Marxis dan beragama Katolik tanpa timbul pertentangan ... Saya katakan bahwa Nicolau Lobato adalah seorang yang percaya pada Marxisme tetapi juga 100% Katolik. Xavier Amaral, Anda mungkin menyebut dia sebagai seorang komunis atau sosial demokrat, tetapi saya tidak setuju-dia sedikit konservatif.⁹⁶

94. Selama periode sebelum konflik bersenjata internal, program dan retorika Fretilin mengandung unsur-unsur yang mencerminkan komunisme. Bahasanya, dimulai dari namanya, adalah revolusioner sosial. Ideologi Mauberanya ditujukan pada sebuah revolusi sosial rakyat, untuk membangun identitas nasional dari akar rumput. Kebijakan-kebijakannya tidak diragukan lagi adalah kiri, yang fokusnya adalah perombakan radikal terhadap pendidikan, kesehatan, dan produksi pertanian. Manifestonya mengklaim bahwa ia adalah "satu-satunya wakil" rakyat Timor-Leste. Retorika seperti ini didengungkan oleh banyak gerakan revolusioner-sosial Marxis yang lain, khususnya dalam gerakan pembebasan di koloni-koloni Afrika.⁹⁷

95. Anggota MFA Portugal juga tidak luput dari debat politik masa itu, dan partai UDT menganggap anggota-anggota Portugis dari MFA [*Movimento das Forças Armadas*: Gerakan Angkatan Bersenjata] menyebarkan ide-ide komunis di Timor. Mario Carrascalão bersaksi kepada Komisi bahwa berbagai unsur sayap kiri dan kanan di pemerintahan Portugis sudah lama bermaksud untuk menyebarkan pandangannya di Timor-Leste:

Ketika MFA datang ke Timor mereka memiliki orang-orang yang beraliran kiri yang ingin menciptakan kondisi-kondisi di Timor sehingga Timor dapat menjadi, saya tidak yakin bagaimana mengatakannya, komunis atau Marxis-Leninis atau Maois...[Sementara itu] polisi rahasia Portugis [DGS] mengatakan kepada UDT bahwa Fretilin telah mengatur pelatihan militer di dua tempat. Siapakah para pelatihnya? Pelatih-pelatih ini berasal dari Vietnam [Komunis] [kata mereka].⁹⁸

96. Beberapa pemimpin UDT sangat peka terhadap saran bahwa Fretilin itu komunis. Komisi mendengar kesaksian bahwa Presiden UDT, Francisco Lopes da Cruz, dan Wakil Presidennya, César da Costa Mouzinho, menjadi semakin ekstrem dalam anti-komunismenya selama 1975 setelah berkunjung ke Australia dan Jakarta.⁹⁹

97. Sering sulit untuk mengatakan apakah propaganda antikomunis Indonesia merupakan ungkapan yang tulus, meskipun salah, dari semangat membara antikomunisme rezim tersebut atau upaya memanipulasikan persoalan untuk membenarkan intervensi. Setelah koalisi dibubarkan pada akhir Mei, siaran radio Indonesia dari Kupang mulai mengecap baik UDT maupun Fretilin sebagai komunis, dengan mengatakan bahwa pemimpin UDT João Carrascalão adalah komunis yang pro-Soviet dan Fretilin pro-Cina. Namun selama masa ini, pejabat Indonesia juga bertemu dengan pemimpin UDT dan mengatakan kepada mereka bahwa Fretilin merupakan ancaman komunis.¹⁰⁰ Hal ini menunjukkan kepada sebagian pemimpin politik Timor

bahwa isu komunisme ini digunakan oleh Indonesia sebagai alasan untuk menekan UDT dan belakangan untuk melakukan intervensi langsung ke Timor Portugis.¹⁰¹ Dalam konteks Perang Dingin, seperti yang dikatakan oleh José Ramos-Horta kepada Komisi, komunisme ialah tuduhan yang mudah dibuat tanpa harus ada dasarnya.¹⁰²

Tidak adanya toleransi politik

98. Walaupun di tingkat nasional terdapat banyak partai politik, dalam banyak kasus pola-pola politik yang muncul di tingkat lokal tidak pluralistik. Militan masing-masing partai secara agresif mempertahankan wilayah politiknya. Tomas Gonçalves dari Apodeti menceritakan tentang pengalamannya ketika mencoba berkampanye di komunitas-komunitas distrik:

UDT sudah masuk Ermera, orang-orang mau memukul saya... jadi saya pergi ke Letefoho dan di sana juga sudah penuh dengan orang-orang UDT. Sepupu saya menjadi camat di sana, dan dia bilang kepada saya, "Kamu sebaiknya kembali, tidak perlu kampanye di sini."¹⁰³

99. Komisi mendengar banyak kesaksian dan pernyataan tentang tidak adanya toleransi politik di tingkat komunitas pada 1974 - 1975. Hal ini terwujud dalam banyak cara, dan tidak jarang berubah menjadi kekerasan. Suatu kebiasaan umum yang sering disebut adalah pemberian kartu identitas oleh partai politik kepada anggotanya, atau memaksa orang membawa kartu tersebut walaupun mereka tidak memutuskan untuk menjadi anggota partai. Para militan partai akan meminta orang-orang untuk menunjukkan kartu mereka, dan bila mereka menunjukkan kartu partai yang "salah", mereka bisa ditahan dan dipukuli.¹⁰⁴ Komisi juga mendengar cerita mengenai para guru yang memaksa murid-muridnya untuk menyatakan kesetiaan kepada suatu partai tertentu, dengan ancaman akan dikeluarkan dari sekolah.¹⁰⁵

100. Xanana Gusmão menceritakan kepada Komisi bagaimana intoleransi ini mendorong terjadinya kekerasan:

Tiap partai menyatakan pandangan mereka sebagai kepentingan nasional, tetapi tidak mempertimbangkan bahwa kita semua adalah orang Timor, juga tidak mempertimbangkan apa yang sedang diperjuangkan oleh seluruh bangsa. Dan karena hal ini, kami melihat kurangnya kemauan para pemimpin partai untuk mengurangi tingkat kekerasan, untuk menyelesaikan apa yang sedang terjadi. Kerap kami melihat bahwa partai-partai tersebut cukup senang ketika para pendukungnya datang dan berkata "Kami pukuli orang ini" atau "Kami bunuh orang itu." Hal seperti ini dianggap sebagai kemenangan kecil... Apabila suatu partai memiliki jumlah anggota terbanyak di suatu subdistrik, partai tersebut tidak memperbolehkan partai-partai lain berkampanye di daerah itu. Dan kemudian ketika partai-partai lain akan pergi ke daerah itu, penduduk akan menyerang, menutup jalan mereka, memboikot, saling melempar batu, dan saling memukul.¹⁰⁶

'Misi mustahil' Lemos Pires

101. Tahap baru dalam proses dekolonisasi Timor Portugis dimulai dengan penunjukan Kolonel Mário Lemos Pires sebagai gubernur pada November 1974. Ia menjadi gubernur terakhir Timor Portugis. Lemos Pires menulis bahwa sebelum mengambil jabatan ini, ia bertanya kepada Presiden Portugis, Jenderal Francisco da Costa Gomes, apabila pemerintah bermaksud untuk menyerahkan Timor Portugis kepada Indonesia. Ia mengatakan kepada presiden bahwa apabila rakyat Timor-Leste tidak diperbolehkan untuk menentukan nasibnya sendiri, dan bila memang itu kebijakannya, ia tidak akan menerima posisi gubernur tersebut.¹⁰⁷ Presiden Portugal dilaporkan menjawab bahwa tidak ada kebijakan seperti itu, walaupun Indonesia merupakan bagian dari realita di mana mereka beroperasi.¹⁰⁸ Dalam sebuah wawancara dengan Komisi, Lemos Pires mengingat kekhawatirannya ketika ia meninggalkan Portugal untuk mengambil posnya sebagai gubernur:

Saya pergi ke Timor-Leste dengan dugaan bahwa dukungan yang akan saya terima dari Pemerintah Portugis akan sangat terbatas, dan lebih buruk dari itu, bahwa fokus politik Portugis atas proses Timor-Leste akan minimal. Ternyata saya benar.¹⁰⁹

102. Tanpa tugas yang jelas dari atasannya di Lisabon, pada saat kedatangannya di Timor Portugis Gubernur Mário Lemos Pires berharap menjalankan program untuk mengatasi apa yang ia pandang sebagai masalah mendesak yang tengah dihadapi oleh koloni ini. Masalah-masalah tersebut ia definisikan sebagai: kondisi militer yang kehilangan semangat; perlunya suatu kebijakan dekolonisasi; perlunya menghidupkan kembali pemerintahan sipil yang lumpuh; dan perlunya mempersiapkan orang Timor-Leste untuk menjalankan pemerintahan negaranya sendiri. Ia mampu menangani beberapa masalah ini, seperti reformasi pendidikan, dengan cepat. Namun mengatasi masalah yang paling mendesak, seperti reformasi militer dan menemukan suatu rumusan dekolonisasi, ternyata jauh lebih sulit. Salah satu persoalannya adalah bahwa ia mendapat sedikit dukungan dari Portugal. Permintaannya untuk mendapatkan arahan yang jelas, diabaikan. Pandangannya sendiri akan dekolonisasi tidak sejalan dengan pandangan tokoh-tokoh kunci seperti Menteri Koordinator Antarwilayah Antonio de Almeida Santos. Sebelum kedatangannya di Timor, komunikasi dengan Portugal dipersulit dengan adanya persaingan antara perwakilan MFA di koloni ini, Mayor Arnão Metello, dan gubernur untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Mário Lemos Pires berupaya mencari jalur komunikasi yang lebih jelas, tapi tim yang ia susun di Kantor Gubernur hanya mencerminkan perpecahan yang juga terjadi di Portugal. Ia tidak dapat berbuat banyak untuk meningkatkan semangat pasukan Portugis yang sudah pupus, yang sebagian besar hanya ingin kembali ke Portugal sesegera mungkin.¹¹⁰

103. Kondisi setempat juga tidak mendukung. Upaya awal gubernur dalam menciptakan mekanisme untuk berkonsultasi dengan partai-partai dalam dekolonisasi selalu menemui hambatan. Ketika mekanisme ini terwujud, yakni dalam bentuk Komisi Dekolonisasi Timor (*Comissão de Descolonização de Timor*, CDT), pada akhir April 1975, perbedaan politik antara partai-partai sudah begitu mendalam, sehingga hal ini mungkin sudah

sangat terlambat. Hal ini, dan juga inisiatif lain seperti rencana implementasi reformasi pendidikan yang dibuat untuk melayani secara lebih baik komunitas penduduk Timor terinterupsi oleh perang saudara Agustus 1975.¹¹¹ Sejak awal, UDT dan Fretilin menolak untuk duduk bersama dengan Apodeti; Apodeti menolak untuk menerima kemerdekaan sebagai opsi dan bersikukuh untuk periode transisi dekolonisasi yang pendek. Kegagalan koalisi Fretilin/UDT pada akhir Mei benar-benar merusak segala kesamaan yang dimiliki kedua partai. Tampak jelas mengapa Mário Lemos Pires berada di Lospalos untuk pengumuman hasil pemilihan lokal, salah satu prakarsa reformasinya, pada 10 Agustus 1975, sehari sebelum UDT melancarkan aksi bersenjatnya.

104. Di kalangan serdadu Timor yang merupakan bagian terbesar tentara, tumbuh anggapan bahwa Portugal sedang dalam proses berpaling dari Timor.¹¹² Banyak anggota tentara Timor mulai terlibat dalam politik pada waktu yang mereka anggap sebagai momen yang penting dalam sejarah negeri mereka. Mário Lemos Pires merenung di hadapan Komisi:

Mereka semua ingin berpihak pada suatu garis politik, namun yang lebih buruk ialah bahwa partai-partai politik, terutama UDT dan Fretilin, masing-masing berusaha meyakinkan mereka untuk membantu dan mendukung partai mereka sendiri. Dengan begitu, yang saya lihat adalah bahwa tentara tidak bisa memenuhi misinya.¹¹³

105. Portugal menolak permintaan Mário Lemos Pires untuk menambah pasukan Portugis, dan hanya memberikan dua kompi pasukan terjun payung elite. Sebagai akibatnya, kekuasaan Portugis berkurang pada saat ketegangan semakin memuncak di koloni dan ketika tekanan luar dari Indonesia mulai muncul. Lemos Pires menyadari bahwa kebijakan Timorisasinya dapat dengan mudah menimbulkan konflik yang tak akan dapat dia kendalikan. Mario Carrascalão mengenang peringatan dari Lemos Pires di hadapan Komisi:

Kalian harus berhati-hati dengan politik kalian. Para penerjun payung yang ada di Timor sekarang bukan untuk melindungi kalian... Mereka di sini untuk mengurus orang asing di Timor, orang Portugis.¹¹⁴

Koalisi antara UDT dan Fretilin

106. Pada 21 Januari 1975, didorong dan didukung oleh Gubernur, dan setelah berulang kali mencoba, Fretilin dan UDT membentuk koalisi. Dua partai tersebut bersatu berlandaskan komitmen bersama untuk kemerdekaan sepenuhnya, penolakan terhadap Apodeti dan integrasi dengan Indonesia, dan pendirian pemerintahan transisional di mana kedua partai tersebut berperan. Sementara Fretilin dan UDT memiliki banyak kesamaan, hubungan mereka tidak harmonis, dan khususnya UDT semakin merasa terancam oleh massa yang mengikuti Fretilin dan klaim berkelanjutan Fretilin yang menyatakan diri sebagai wakil tunggal rakyat Timor-Leste.¹¹⁵ Kedua partai terus saling menyerang secara verbal, dan persetujuan

ini meluas ke distrik-distrik. Koalisi ini tidak memiliki mekanisme politik untuk mengatasi berbagai perbedaan dan menyatukan partai-partai tersebut.¹¹⁶

107. Sementara sejumlah elemen Fretilin terus menganggap UDT sebagai kelompok reaksioner ultrakonservatif, sejumlah anggota UDT menjadi semakin khawatir dengan apa yang mereka lihat sebagai pengaruh radikal dalam Fretilin. Mulai akhir 1974, Indonesia meningkatkan propaganda antikomunismenya. Siaran propaganda mereka dari Kupang meliputi uraian tentang kejadian sehari-hari, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki jaringan intelijen yang sangat efektif di wilayah Timor Portugis.¹¹⁷ Komisi mendengar dari mantan Gubernur Mário Lemos Pires bahwa pemerintah Indonesia khawatir dengan persatuan rakyat Timor yang diperlihatkan oleh koalisi tersebut, dan mengambil tindakan untuk melemahkannya.¹¹⁸

108. Wakil militer Indonesia yang terlibat dalam Operasi Komodo mengunjungi Timor Portugis sepanjang bulan-bulan tersebut. Pada awal April 1975, delegasi yang terdiri atas Kolonel Sugianto, Kolonel Soeharto, dan beberapa yang lain bertemu dengan Gubernur Mário Lemos Pires dan para pemimpin tiga partai politik utama tersebut. Pada April 1975, Ali Moertopo mengundang perwakilan Fretilin dan UDT secara bersamaan tetapi terpisah untuk berkunjung ke Jakarta.¹¹⁹ Menurut José Ramos-Horta, yang bersama dengan Alarico Fernandes mewakili Fretilin dalam pertemuan Jakarta pada April tersebut:

Kunjungan ini...dipandang berbeda oleh kami dan oleh Indonesia. Kami melihat kunjungan ini dapat menjernihkan keadaan, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk semakin memecah-belah kita.¹²⁰

109. Sekembali para wakilnya dari kunjungan ke Jakarta, UDT mengadakan pertemuan Komite Sentral dan memilih mundur dari koalisi. Komisi mendengarkan kesaksian bahwa UDT membuat keputusan ini setelah pertemuan yang panjang dan sulit, yang memperlihatkan perpecahan besar dalam tubuh partai mengenai masalah tersebut. Domingos Oliveira mengatakan kepada Komisi:¹²¹

*Mayoritas mutlak memutuskan untuk mundur dari koalisi, mengakhiri koalisi. Mereka berkata "koalisi ini dimaksudkan untuk menolong kita, untuk menolong menciptakan perdamaian, mempersatukan kita saat kita berjuang menuju kemerdekaan, tetapi kita justru saling menyerang. Maka lebih baik koalisi diakhiri." Namun ini adalah suatu kesalahan... Karena ketika kami mengakhiri koalisi, situasi semakin buruk.*¹²²

110. Komisi mendengar bahwa setelah koalisi pecah, ketegangan dan ancaman kekerasan meningkat.¹²³

111. Suatu akibat langsung perpecahan koalisi ini adalah bahwa jalan menjadi semakin terbuka bagi Indonesia untuk memanfaatkan ketakutan para pemimpin UDT tentang apa yang dianggap sebagai ancaman komunis. Suatu akibat politik jangka panjang adalah bahwa kedua partai politik Timor utama ini menjadi berseteru selama bertahun-tahun.

Keterlibatan Indonesia yang semakin besar di Timor Portugis: Destabilisasi dan Diplomasi

Tinjauan

112. Sementara pemerintah Portugis di Timor-Leste mulai menerapkan program dekolonisasi, dan partai-partai politik Timor-Leste berebut menggaling dukungan, Indonesia aktif pada dua front untuk mendapatkan hasil yang akan memuaskan kepentingannya di wilayah itu.

113. Tak lama setelah Revolusi Anyelir di Portugal, Indonesia semakin meningkatkan operasi pengumpulan intelijen di dalam Timor Portugis. Indonesia juga berupaya untuk memengaruhi kalangan politikus Timor-Leste untuk mendukung opsi integrasi. Dari awal 1975, Indonesia mulai menyusun rencana solusi militer. Kebijakan yang tampak semakin militeristik yang diambil Indonesia terhadap Timor Portugis dapat ditelusuri pada keyakinannya bahwa tujuan integrasinya tidak akan mungkin tercapai tanpa kekerasan. Setelah awalnya meminta jaminan kepada Portugal bahwa Timor-Leste tidak akan menjadi ancaman bagi keamanannya, Indonesia segera berkesimpulan bahwa kepentingan keamanannya hanya akan tercapai apabila Timor-Leste tidak menjadi negara merdeka. Perubahan ini didasari oleh persepsi mengenai kepentingan keamanan Indonesia yang sangat terkondisi oleh pandangan antikomunisme Perang Dingin pada masa itu. Indonesia mampu mendapatkan pendukung untuk pandangannya mengenai Timor-Leste di antara para sekutu Barat dan Asianya, dan sedikit banyak di Portugal juga.

Operasi Komodo dan peningkatan operasi Rahasia Militer

114. Pada awal 1975, campur tangan Indonesia di Timor Portugis telah mencapai taraf yang tidak lagi dapat disebut rahasia. Agen Bakin, Luis Taolin, adalah pengunjung reguler ke Dili dari basisnya di Timor Barat. Pasukan khusus Indonesia diketahui melatih simpatisan Apodeti di Timor Barat. Kampanye disinformasi Operasi Komodo semakin ditingkatkan, melalui berbagai siaran radio yang gencar ke Timor Portugis dari Kupang, dan dengan menyebarkan berbagai cerita di media Indonesia dan luar negeri. Siaran radio mengklaim bahwa Portugal akan segera menarik diri dari koloni tersebut, menyebarkan cerita-cerita tanpa dasar mengenai infiltrasi Vietnam dan Cina ke wilayah tersebut, dan berdalih bahwa integrasi adalah satu-satunya pilihan. Mereka semakin memanas-manasi rasa saling curiga di antara berbagai pihak, dan menimbulkan keraguan di antara orang Timor yang tidak terikat dengan partai politik tertentu.¹²⁴

115. Setelah UDT dan Fretilin membentuk koalisi mereka pada akhir Januari 1975, pihak Indonesia semakin meningkatkan aktivitas militer. Pada Februari, diadakan latihan lintas-angkatan secara besar-besaran di Sumatera Selatan, yang secara efektif

merupakan gladiresik bagi invasi berskala penuh,¹²⁵ serta peningkatan kehadiran pasukan di sepanjang perbatasan dengan Timor Portugis.¹²⁶

116. Antara Desember 1974 dan Februari 1975, Tim Kopassandha (Komando Pasukan Sandi Yudha) beranggotakan delapan orang, yang dipimpin oleh Kolonel Dading Kalbuadi, tiba di Atambua. Tim ini mempersiapkan medan untuk apa yang nantinya menjadi 'Operasi Flamboyan.' Sebagai operasi taktis intelijen, Operasi Flamboyan merupakan buah pikiran Mayor Jenderal Benny Moerdani atas perintah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Mereka membentuk jaringan agen lintas-batas Komodo,¹²⁷ dan mengambil alih pelatihan 216 orang Timor yang direkrut, yang dikenal dengan nama Partisan, di Atambua, yang dipimpin Tomas Gonçaves dari Apodeti. Komisi mendengar kesaksian bahwa pelatihan Partisan Apodeti semakin ditingkatkan setelah kedatangan Tim Kopassandha pimpinan Kolonel Kalbuadi. Menurut Tomas Gonçaves, orang Indonesia juga tertarik untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang militer dan hal lain mengenai Timor Portugis.¹²⁸

Di sana, mereka [orang-orang Indonesia] tidak berbicara dengan kami. Mereka menyebut kita anggota 'partisan', dan anggota partisan tidak berbicara dengan mereka... Ketika mereka memanggil saya mereka bertanya, "Kira-kira berapa banyak senjata dimiliki Timor? Berapa kompi? Apakah banyak orang yang bisa menggunakan senjata api? Apakah mereka tahu bagaimana menjadi pejuang gerilya?"¹²⁹

117. Pada Januari 1975, pemerintah Portugis mengirim delegasi ke Atambua untuk mencoba meyakinkan para Partisan Apodeti untuk kembali ke Timor Portugis, namun mereka tidak berhasil.¹³⁰ Sementara itu, Kapten Yunus Yosfiah mulai merekrut dan melatih lebih banyak lagi pasukan Kopassandha di Jawa Barat. Pada akhir April, sebuah tim Kopassandha beranggotakan 80 orang tiba di Atambua.¹³¹

Diplomasi Indonesia

118. Keputusan Indonesia untuk meningkatkan aktivitas militernya dengan pelatihan, latihan perang, dan pengumpulan informasi intelijen dilakukan bersamaan dengan kontak dengan negara-negara yang punya kepentingan atas masa depan Timor Portugis, terutama Portugal dan Australia serta Amerika Serikat.

Pertemuan di Lisabon antara Portugal dan Indonesia, 14 - 15 Oktober 1974

119. Sebelum pengunduran diri Presiden Spínola pada September 1974, Indonesia telah meminta diadakan pertemuan dengan pemerintah Portugal untuk membahas masalah Timor. Pada pertengahan Oktober 1974, Presiden Soeharto mengirim

* Menurut *Korps Marinir TNI AL, 1970 - 2000*, hal. 285, Operasi Flamboyan dilancarkan pada 5 Oktober sampai 5 Desember 1975.

delegasi Indonesia yang dipimpin oleh orang kepercayaannya, Jenderal Ali Moertopo, ke Lisabon untuk membahas Timor Portugis. Mereka bertemu Presiden Costa Gomes, Perdana Menteri Vasco Gonçalves, Menteri Luar Negeri Mario Soares, dan pejabat senior di kementerian luar negeri, sekretaris negara Jorgé Campinos.

120. Kelahiran Fretilin dan kejatuhan Presiden Spínola yang konservatif pada September 1974 telah memicu kekhawatiran Indonesia dan membuat mereka yakin akan perlunya mendapatkan pernyataan pemerintah baru Portugal mengenai masa depan wilayah ini. Menurut laporan delegasi Indonesia, terdapat kesepakatan di antara para pemimpin Portugis bahwa integrasi dengan Indonesia akan menjadi hasil terbaik. Menurut versi laporan ini yang diterbitkan, Presiden Costa Gomes mengatakan kepada delegasi bahwa satu-satunya opsi yang realistis adalah hubungan dengan Portugal yang terus berlanjut atau integrasi dengan Indonesia. Ia konon pernah mengatakan secara pribadi bahwa Portugal tidak mempertahankan hubungan dengan koloninya tersebut. Sekali lagi menurut pihak Indonesia, Sekretaris Negara dan Perdana Menteri lebih tidak ragu-ragu menyatakan dukungan mereka bagi integrasi, walaupun mereka juga menyebut perlunya menyerahkan hal ini kepada kehendak rakyat Timor-Leste.¹³²

121. Delegasi Indonesia memberi tahu Presiden Soeharto bahwa para pemimpin Portugis berpandangan bahwa integrasi adalah opsi terbaik yang ada. Mário Lemos Pires menulis dalam bukunya:

Bisa saja, delegasi Indonesia menyadari bahwa posisinya lebih baik daripada yang mereka bayangkan sebelumnya - bahwa Portugal tidak menentang integrasi dengan Indonesia dan Portugal juga tidak memandang kemerdekaan sebagai suatu opsi. Tapi Jenderal Ali Moertopo lupa bahwa, meskipun belum ada kebijakan yang ditetapkan, pemerintah Portugis tetap mendukung prinsip penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Dia terlalu cepat menyimpulkan, entah karena dia sangat senang atau karena nada percakapan pada waktu itu memungkinkannya menarik kesimpulan bahwa Portugal menyukai gagasan integrasi dengan Indonesia dan akan memfasilitasi tindakan Indonesia ke arah itu.¹³³

122. Analisis mengenai pertemuan ini bisa memberi pemerintah Portugal terlalu banyak pujian. Laporan komisi penyelidik militer Portugis mengenai dekolonisasi Timor mengemukakan pendapat yang lebih keras, yang menyimpulkan bahwa “pertemuan di Lisabon gagal melewati ujian yang diberikan Indonesia mengenai ketetapan hati Portugal untuk menentang integrasi Timor dengan Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap Portugal ini telah sedikit banyak mendorong Indonesia dalam niatnya.”¹³⁴

123. Kesimpulan ini sebagian dikonfirmasi oleh sikap pemerintah Portugal setelah pertemuan tersebut. Sekretaris negara untuk administrasi mengirimkan telegram kepada Menteri Koordinator Antar-Wilayah, Antonio de Almeida Santos, yang ketika itu sedang berkunjung ke Timor. Telegram tersebut meminta bahwa

mengingat pertemuan dengan Jenderal Ali Moertopo, selama kunjungannya menteri ini agar tidak memberi angin pada opsi kemerdekaan dalam pernyataan-pernyataan publiknya. Menteri tersebut menuruti permintaan ini. Dalam pidatonya pada sebuah acara penerimaan di *Palácio das Repartições* (kini *Palácio do Governo*), Almeida Santos, walau menekankan bahwa rakyat Timor harus bebas menentukan nasibnya sendiri, berbicara dengan lebih bersemangat mengenai kemungkinan mempertahankan hubungan dengan Portugal atau integrasi dengan Indonesia ketimbang kemerdekaan, yang ia katakan tidak akan realistis mengingat Timor masih jauh dari “kemerdekaan ekonomi”¹³⁵

Pertemuan di London antara Portugal dan Indonesia, 9 Maret 1975

124. Terusik oleh semakin meningkatnya aktivitas rahasia Indonesia, Portugal meminta pertemuan kedua dengan Indonesia.¹³⁶ Pertemuan tersebut diadakan di London pada 9 Maret 1975 dengan Jenderal Ali Moertopo kembali memimpin delegasi Indonesia.¹³⁶ Pihak Indonesia mengambil garis tegas, dan menolak rencana Portugis bagi suatu pemerintahan transisi dan segala langkah untuk membawa permasalahan ini ke kancah internasional, dan mengklaim bahwa integrasi adalah satu-satunya solusi dan mengajukan agar Indonesia memiliki peran penasihat dalam pemerintahan koloni ini. Portugal menegaskan kembali prinsip bahwa rakyat Timor-Leste perlu didengar mengenai status masa depan koloni tersebut. Tapi, sekali lagi, tampaknya lagi-lagi Portugal memberi angin kepada Indonesia, ketika, contohnya, Portugal mengatakan bahwa Indonesia berhak untuk memberi dukungan aktif kepada Apodeti. Dengan demikian, Portugal memberi Indonesia status yang melampaui status ‘pengamat berkepentingan’.

125. Seperti dalam pertemuan di Lisabon lima bulan sebelumnya, Indonesia menganggap bahwa mengalahnya Portugal berarti bahwa Portugal memiliki pandangan yang sama bahwa integrasi dengan Indonesia adalah hasil terbaik. Presiden Soeharto mengungkapkan pandangannya mengenai apa yang terjadi dalam pertemuan London kepada Gough Whitlam, sebulan kemudian dalam sebuah pertemuan di Townsville. Dia memberikan penafsiran yang sangat berbeda mengenai posisi pihak Portugis dibanding catatan resmi pihak Portugis sendiri, dan rangkuman versi Soeharto mengenai pertemuan tersebut, seperti yang diungkapkan kepada Whitlam berbunyi sebagai berikut:

Dalam pertemuan di London, Pemerintah Portugis berkata bahwa integrasi dengan Indonesia adalah hasil terbaik, asalkan, tentu saja, hal ini adalah yang diinginkan oleh penduduk wilayah tersebut. Portugis juga setuju bahwa tidak perlu ada “campur tangan

.....
* Delegasi Portugal terdiri atas Menteri Koordinator Antar-Wilayah Antonio de Almeida Santos, Menteri tanpa portofolio Vitor Alves, Sekretaris Negara Urusan Luar Negeri Jorgê Campinos, dan Kepala Kantor Urusan Politik di pemerintahan Timor, Mayor Francisco Mota. Delegasi Indonesia terdiri atas Ali Moertopo, Duta Besar Indonesia di Inggris dan Prancis, dan Kapten Suharto dari Badan Intelijen BAKIN.

internasional” dalam kebijakan Portugis tentang dekolonisasi di Timor. Terserah Indonesia untuk mencapai integrasi dengan wilayah ini. Untuk tujuan di atas, Indonesia memperoleh persetujuan pemerintah Portugis untuk membantu dan membangun ... Apodeti, dan untuk melakukan pendekatan kepada, dan untuk mempengaruhi garis kebijakan partai UDT dan Fretilin.¹³⁷

Pertemuan antara Soeharto dan Whitlam, di Wonosobo, 6 September 1974, dan di Townsville, 4 April 1975

126. Soeharto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam dua kali selama periode 1974 - 1975. Pertama di Wonosobo, dekat Yogyakarta pada 6 September 1974, dan di Townsville, Queensland pada 4 April 1975. Timor Portugis dibahas dalam kedua pertemuan tersebut, dan dalam kedua pertemuan Whitlam diyakini telah memberi Soeharto lampu hijau untuk mengambil alih wilayah tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh notula Australia yang kini merupakan arsip umum (lihat Bab 7.1.: Hak Menentukan Nasib Sendiri). Dalam kedua kesempatan tersebut, Whitlam mengatakan kepada Soeharto bahwa pemerintahnya menganggap Timor seharusnya menjadi bagian dari Indonesia untuk alasan-alasan yang hampir identik dengan apa yang dinyatakan Soeharto: bahwa Timor tidak bisa bertahan sebagai negara merdeka dan oleh karenanya akan selalu menjadi “pusat perhatian” negara-negara yang lebih kuat.¹³⁸ Pada pertemuan di Wonosobo, Soeharto secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia dan Australia memiliki kepentingan strategis yang sama di Timor Portugis--Timor-Leste yang merdeka akan menjadi mangsa bagi Cina atau Uni Soviet sehingga akan menjadi “duri dalam mata Australia dan duri di punggung Indonesia.”¹³⁹

127. Pada saat yang sama mereka sepakat bahwa integrasi harus terjadi melalui proses yang mengakui hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, dengan tambahan dari Whitlam bahwa hal ini harus dilakukan “dengan cara yang tidak akan mengusik rakyat Australia” seperti yang dikatakannya di Townsville.¹⁴⁰ Keduanya tidak menjelaskan tujuan mana yang akan lebih dipentingkan apabila tidak mungkin mencocokkan kehendak orang Timor atas penentuan nasib sendiri dengan keinginan Indonesia untuk integrasi. Di Townsville pada April 1975, walaupun masih menghindari menggunakan senjata, Soeharto tampaknya sudah hampir memutuskan persoalan ini dengan mengatakan bahwa tindakan penentuan nasib sendiri tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan kehendak sebenarnya rakyat Timor. Whitlam bersimpati, dan mengungkapkan pendapatnya bahwa orang biasa di Timor “tidak memahami politik” dan akan memerlukan waktu “untuk menyadari hubungan kekerabatan etnisnya dengan tetangga Indonesia mereka.”¹⁴¹

128. Di samping segala keraguannya, terdapat bukti bahwa pandangan Whitlam yang diungkapkan di pertemuan Yogyakarta tampaknya telah sangat memengaruhi keputusan Indonesia bahwa tidak ada alternatif selain penggabungan. Pada 14

Oktober 1974, Duta Besar Australia untuk Portugal melaporkan ke pada Pemerintah Australia mengenai perbincangan antara Ali Moertopo selama kunjungannya ke Lisabon: "Ali [Moertopo] mengatakan bahwa sebelum kunjungan Whitlam ke Jakarta mereka belum membuat keputusan mengenai Timor. Namun dukungan Perdana Menteri mengenai gagasan penggabungan dengan Indonesia membantu mereka menjernihkan pemikiran mereka dan kini mereka sangat yakin tentang kebijakannya langkah ini".¹⁴²

129. Juga terdapat bukti bahwa dalam mengatasi dilema antara penggabungan dan penentuan nasib sendiri, Gough Whitlam cenderung lebih memilih yang pertama. Ia mengungkapkan pandangannya mengenai hal ini secara jujur dalam sebuah pesan rahasia yang ia kirim kepada Menteri Luar Negerinya pada 24 September 1974, dua minggu setelah pertemuannya di Wonosobo: "Saya mendukung penggabungan, tapi penentuan nasib sendiri perlu dituruti."¹⁴³ Duta besar Whitlam di Jakarta, Richard Woolcott, juga yakin bahwa dalam pandangan Perdana Menteri, penggabungan adalah tujuan yang lebih utama. Dan tampaknya juga menjadi pandangan Woolcott bahwa hal ini harus menjadi tujuan utama Australia hanya karena ini merupakan tujuan utama Indonesia. Dalam pesan telegramnya kepada Menteri Luar Negerinya, Don Willessee, pada 17 April 1975, tak lama sesudah pertemuan Townsville, Woolcott mempertentangkan pendapat menteri mengenai hal ini dengan pendapat Perdana Menteri:

[Anda] cenderung menekankan proses tindakan penentuan nasib sendiri yang selayaknya bagi Timor Portugis...[J]elas dalam pertemuan Townsville bahwa Perdana Menteri terus menganggap bahwa logika situasinya adalah bahwa Timor harus menjadi bagian dari Indonesia dan kita akan 'menyambut' hasil seperti itu dibandingkan tindakan pilihan sendiri. Walaupun kita mendukung prinsip penentuan nasib sendiri, dan meskipun kita tidak bisa membenarkan penggunaan kekuatan, Perdana Menteri tetap tidak menginginkan munculnya Timor-Leste yang merdeka dan ia percaya bahwa penekanan secara terbuka mengenai penentuan nasib sendiri, pada tahap ini, akan semakin memperkuat tekanan bagi kemerdekaan.¹⁴⁴

130. Dalam otobiografinya Richard Woolcott mengutip dari telegram lain untuk menjelaskan pemikiran di belakang posisi ini:

Indonesia akan bertindak untuk menyatukan Timor. Sementara Presiden Soeharto ingin agar penyatuan ini dicapai dengan cara yang sedapat mungkin terlihat baik, Indonesia tidak akan mundur dari tujuan kebijakan yang mendasar ini. Indonesia menganggap hasil ini sangat esensial bagi kepentingan nasional jangka panjangnya dan, memang, merupakan juga kepentingan kawasan tersebut seutuhnya. Indonesia secara konsisten meyakini keputusan ini sejak beberapa bulan sebelum saya menduduki pos ini Maret lalu.¹⁴⁵

Pertemuan Makau, 26 - 28 Juni 1975

131. Pada April 1975 Gubernur Mário Lemos Pires membentuk Komisi untuk Dekolonisasi Timor (*Comissão de Descolonização de Timor*, CDT). Pertemuan Mei dengan koalisi UDT-Fretilin, yang diboikot oleh Apodeti, membahas program dekolonisasi yang didasarkan atas hak untuk merdeka, pemerintah transisi, dan majelis permusyawaratan lokal. Namun pada 27 Mei UDT memutus koalisinya dengan Fretilin, yang menyebabkan pembicaraan terhenti.¹⁴⁶ Sebagai tanggapannya, Portugal membuat rencana untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi mengenai dekolonisasi di Makau.

132. Pada 26 - 28 Juni, Antonio de Almeida Santos, Menteri Koordinator Antar-Wilayah Portugal, bertemu dengan UDT, Apodeti, dan pengamat diplomatik Indonesia di Makau. Fretilin berkeberatan atas partisipasi Apodeti dan Indonesia, dan memboikot pertemuan tersebut. Fretilin curiga bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari strategi Portugal untuk menyerahkan Timor-Leste kepada Indonesia:

*Mereka menjajah kami selama 450 tahun dan mereka sudah bosan, maka mereka berikan kami kepada orang lain sambil berkata, "Pergilah dan dirikan pemerintahan di sana sekarang." Jadi berapa lama kami akan menjadi budak? Karena itulah saya tidak bersedia pergi ke sana. Konferensi di Makau adalah taktik Portugal dan Indonesia untuk mengintegrasikan Timor ke Indonesia.*¹⁴⁷

133. Anggota senior Fretilin lebih memilih untuk menghadiri upacara kemerdekaan Mozambik.¹⁴⁸ Pertemuan puncak Makau hanya menguntungkan kepentingan Indonesia karena pertemuan ini mengakui bahwa baik Apodeti maupun Jakarta memiliki kepentingan dalam proses ini. Hasil pertemuan tersebut adalah Undang-Undang 7/75, yang memaparkan: struktur pemerintahan sementara dengan partisipasi semua partai; jadwal untuk pemilihan umum 1976; dan berakhirnya kedaulatan Portugis pada 1978. Pertemuan ini juga menyusun dasar legislatif yang menutup upaya Indonesia untuk mendapat jaminan agar integrasi menjadi hasil akhir dari proses dekolonisasi sebagai hasil kesepakatan langsung. Tapi, sebagai langkah mundur dari pengakuan CDT pada Mei, Undang-Undang 7/75 hanya mengakui hak atas penentuan nasib sendiri. Pertemuan tersebut merancang proses dekolonisasi yang akan membentuk pemerintahan transisi, yang terdiri atas orang Timor-Leste yang dipilih dan orang-orang Portugis yang diangkat, dan sebuah dewan penasihat pemerintahan. Lembaga-lembaga nasional ini akan didukung di tingkat distrik oleh dewan-dewan lokal.

134. Partai-partai politik memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap program dekolonisasi yang diputuskan di Makau. Fretilin mengambil posisi yang tidak jelas, tidak menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam pemerintahan transisi yang diusulkan, juga tidak sepenuhnya menolak, tapi hanya mengatakan bahwa mereka akan ambil bagian dalam pemilihan umum 1976 yang diusulkan.¹⁴⁹ UDT menerima hasilnya. Apodeti, seperti Indonesia, menolaknya dengan dasar bahwa kemerdekaan

memang merupakan satu-satunya pilihan, dan jangka waktunya terlalu lama. Setelah pertemuan ini, ketegangan antarpartai meningkat, UDT tersinggung atas boikot Fretilin, dan Fretilin marah karena Apodeti terlibat. Kedua partai besar Timor-Leste tersebut juga merasa bahwa Portugal tidak berterusterang, dan mengetahui tentang pertemuan bilateral antara Portugal dan Indonesia. Mario Carrascalão mengenang dampak dari pertemuan-pertemuan bilateral ini:

Indonesia... mendampingi Apodeti ke Makau dan mengadakan pertemuan di Hong Kong dengan delegasi Pemerintah Portugis di sana. Apa yang mereka rencanakan? Sampai hari ini mereka tidak mengatakan apa yang mereka lakukan dalam rapat tersebut. Kami tidak tahu... Apa yang mereka lakukan? Ini bukan masalah Indonesia. Ini adalah masalah Timor, tetapi [Indonesia] merekalah yang mengadakan pertemuan. Pertemuan rahasia dengan mereka [Portugis]. Kenapa? Orang-orang memanfaatkan hal ini, akibatnya rakyat menjadi terbagi-bagi.¹⁵⁰

Pertemuan antara Presiden Soeharto dan Presiden Gerald Ford, 5 Juli 1975

135. Pada 5 Juli, dalam sebuah pertemuan di Camp David dengan Presiden Gerald Ford selama kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Soeharto menggariskan kebijakan Indonesia mengenai Timor-Leste. Ia menutup kata-katanya dengan kalimat:

Jadi, satu-satunya jalan adalah integrasi dengan Indonesia.

136. Soeharto berpendapat bahwa sebuah Timor Portugis merdeka tidak akan dapat berjalan, dan bahwa akan sulit bagi Portugal untuk bisa terus menjalankan negara ini karena keterpencilannya dari wilayah itu.¹⁵¹

137. Sebelumnya ia meyakinkan Presiden Ford bahwa Indonesia tidak akan menggunakan kekuatan terhadap wilayah negara lain. Seperti halnya dalam pertemuannya dengan Whitlam di Townsville, Soeharto membesar-besarkan argumen bahwa karena “tekanan kuat” oleh partai prokemerdekaan, akan sangat sulit untuk memastikan kehendak sebenarnya rakyat Timor-Leste. Indonesia menghadapi masalah “bagaimana mengatur sebuah proses penentuan nasib sendiri agar mayoritas ingin bersatu dengan Indonesia”. Selama percakapan mereka, Presiden Ford tidak mengungkapkan pandangannya mengenai posisi Amerika Serikat dalam persoalan ini.

138. Bungkamnya Ford mungkin merupakan cerminan kebijakan Amerika Serikat terhadap Timor Portugis. Menurut Mantan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Woolcott:

Amerika Serikat, terlibat di Timur Tengah, terbebani oleh dampak Watergate, dan kelelahan akibat kegagalannya di Vietnam, benar-benar tidak peduli akan masa depan Timor-Leste. Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta bahkan diminta pada tahun 1975 untuk mengurangi laporan kedutaan tersebut mengenai masalah itu.¹⁵²

Gerakan Bersenjata 11 Agustus dan konflik bersenjata internal

Tinjauan

139. Kurang dari dua minggu setelah kembali dari Jakarta, para pemimpin UDT melancarkan Gerakan Bersenjata 11 Agustus. Kadang disebut kudeta, percobaan kudeta, gerakan, atau pemberontakan, aksi bersenjata ini dimulai di ibukota Dili dan dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. UDT merebut beberapa instalasi penting, dan memberikan daftar permintaan kepada pemerintah Portugis. Mereka mengklaim bahwa gerakan tersebut ditujukan untuk menghilangkan elemen-elemen ekstremis dari negeri tersebut untuk mencegah intervensi Indonesia.¹⁵³ Fretilin mundur ke basis pertahanan mereka di perbukitan Aileu. Karena dia tidak dapat menjamin keamanan, berbagai usaha Gubernur Portugis untuk mengajak kedua pihak ke meja perundingan tidak berhasil. Pada 20 Agustus, Fretilin membalas, dengan dukungan sebagian besar anggota militer Portugis yang orang asli Timor. Konflik ini meluas ke sebagian besar wilayah negeri tersebut. Para pemimpin kedua partai besar tersebut mengatakan kepada Komisi bahwa mereka kehilangan kendali atas situasi tersebut. Konflik bersenjata ini relatif cepat selesai, dan pada awal September, sekitar 20.000 orang yang sebagian besar dari UDT, tetapi juga termasuk anggota dari partai-partai lain, telah terdesak menuju perbatasan dengan Timor Barat. Mereka menyeberang ke Timor Barat sebelum akhir bulan.

140. Pemerintahan Portugis berusaha membawa partai-partai tersebut ke meja perundingan. Gubernur menyimpulkan bahwa dia tidak dalam posisi untuk mengendalikan situasi tersebut dengan cara-cara militer.¹⁵⁴ Tidak berdaya untuk memengaruhi kejadian-kejadian dan terkurung di zona netral di Farol, Pemerintahan Portugis menarik diri ke Pulau Ataúro pada malam hari 26 Agustus.

141. Pada September 1975 Indonesia mengharuskan UDT dan sekutu-sekutunya yang telah lari melintasi perbatasan untuk menandatangani petisi prointegrasi kepada Presiden Soeharto. Sebagai imbalannya, Indonesia menawarkan dukungan materi dan logistik. Indonesia meningkatkan operasi-operasi militernya sendiri, dengan pertama melancarkan beberapa serangan lintas-batas, dan kemudian, sejak awal Oktober, operasi-operasi militer berskala lebih besar yang berhasil menguasai sejumlah kota-kota strategis di dekat perbatasan.¹⁵⁵

UDT melancarkan gerakan bersenjata 11 Agustus

142. Sejak pecahnya koalisi mereka pada Mei, ketegangan antara UDT dan Fretilin terus meningkat, baik di Dili maupun di distrik-distrik. Pada awal Agustus, UDT memutuskan untuk mengirim sekretaris jenderal mereka, Domingos de Oliveira, dan anggota Komite Sentral yang bertanggung jawab atas hubungan luar negeri, João Carrascalão, ke Jakarta. Mereka berharap dapat bertemu dengan Presiden Soeharto. Namun mereka justru ditemui oleh Ali Moertopo. Domingos de Oliveira mengatakan pada Komisi bahwa keputusan untuk mengirim delegasi ke Jakarta didorong oleh adanya kebutuhan “untuk menghancurkan semua dalih Indonesia untuk menginvasi Timor”. Misi kedua wakil UDT tersebut adalah untuk meyakinkan Moertopo bahwa Fretilin sesungguhnya adalah gerakan nasionalis dan bahwa UDT mampu “membersihkan pekarangan kami sendiri” dengan mengusir pejabat-pejabat Portugis dan para pemimpin Fretilin yang bersimpati kepada komunis. Menurut cerita João Carrascalão tentang pertemuan tersebut, Moertopo mengatakan jika mereka memang mampu membersihkan pekarangannya sendiri, Indonesia akan menghormati hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Dengan merenungkan kembali, João Carrascalão sekarang menganggap kedua wakil UDT tersebut sungguh naif karena memercayai kata-kata Moertopo dan bahwa sesungguhnya “semuanya telah direncanakan untuk pengambilalihan Timor-Leste”, seperti yang dikatakan padanya dalam suatu percakapan pribadi di Kupang dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, El Tari, dalam perjalanannya kembali ke Dili.¹⁵⁶

143. Tentu saja ini juga merupakan pandangan dari diplomat yang mungkin paling banyak tahu di Jakarta, Duta Besar Australia Richard Woolcott, bahwa jauh sebelumnya sudah “menjadi kebijakan Indonesia yang tetap untuk menggabungkan Timor”.¹⁵⁷ Pada pertemuan tersebut Ali Moertopo mengatakan bahwa Indonesia telah menerima informasi dari intelijen bahwa Fretilin merencanakan kudeta pada 15 Agustus.¹⁵⁸

144. Para anggota UDT telah mempertimbangkan aksi antikomunis selama beberapa minggu sebelum 11 Agustus.¹⁵⁹ Tujuan utama dari gerakan bersenjata adalah, seperti yang ditekankan para pemimpinnya sekarang, bukan untuk mengambilalih kekuasaan melainkan untuk meluruskan kembali proses dekolonisasi yang dipercaya UDT telah dibajak oleh elemen-elemen “ambisius, tidak bertanggung jawab, dan bermaksud buruk”, dan untuk mencegah kudeta Fretilin, yang konon direncanakan pada 15 Agustus.¹⁶⁰ Tetapi, ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab, khususnya tentang peran Indonesia dalam berbagai kejadian ini dan apa tujuan sebenarnya dari para pemimpin kudeta tersebut. Sejumlah kesaksian yang diterima Komisi sedikit menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini, tapi tidak cukup untuk memberi jawaban yang pasti atas sejumlah pertanyaan tersebut.

* Dalam submisinya kepada CAVR, mantan Sekretaris Jenderal UDT Domingos de Oliveira, memberikan daftar tentang insiden yang terjadi antara Juni dan awal Agustus yang menunjukkan rusaknya hubungan kedua partai. [Submisi diberikan tertulis setelah kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003. Arsip CAVR.]

145. Meskipun daftar sasaran mereka jauh lebih panjang dan termasuk semua fasilitas militer utama, gerakan bersenjata tersebut merebut markas polisi dan ‘menangkap’ komandannya Letnan Kolonel Rui Magiolo Gouveia serta pasokan senjatanya, dan menguasai sejumlah instalasi penting, termasuk pelabuhan, bandar udara, dan fasilitas radio dan telepon di Dili.¹⁶¹ Pemimpin gerakan bersenjata João Carrascalão bertemu dengan Gubernur Lemos Pires sekitar pukul 1 pagi pada 11 Agustus, dan menyatakan maksud UDT untuk menghilangkan berbagai elemen komunis dari pemerintah dan dari Fretilin. Mantan gubernur menulis beberapa tahun kemudian bahwa gerakan tersebut tidak bermaksud untuk menyingkirkan pemerintah Portugis, dan bahwa gerakan itu tidak mengharapkan intervensi militer. Keesokan harinya gerakan ini mengajukan tuntutan kepada Gubernur Lemos Pires. Tuntutan tersebut termasuk: penggantian anggota militer tertentu, proses dekolonisasi yang dipercepat, mengalihkan kekuasaan kepada UDT, dan mengakui wewenang ekstra-yudisial UDT sebagai gerakan pembebasan.¹⁶²

146. Unjuk kekuatan UDT tersebut konon tidak diarahkan kepada Fretilin, tetapi lebih kepada “unsur-unsur komunis” di dalam Fretilin. Namun segala harapan UDT bahwa Fretilin akan serta-merta membuang para “ekstremis”-nya dan bergabung dengan UDT untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan segera pupus. Fretilin tetap bersatu dan menuntut pemerintah kolonial Portugis untuk melucuti UDT.¹⁶³ UDT menahan ratusan anggota Fretilin, termasuk beberapa pemimpin partai di markasnya di Palapaço, Dili, di mana penganiayaan adalah sesuatu yang biasa dan ada beberapa orang yang meninggal dalam keadaan yang tidak jelas.¹⁶⁴

147. Momentum awal berada pada UDT. Selama beberapa hari setelah “percobaan kudeta” pada 11 Agustus, para pendukung UDT menahan ratusan pemimpin Fretilin dan pendukungnya di seluruh wilayah tersebut. Gubernur Lemos Pires memutuskan untuk tidak menentang UDT dengan kekerasan. Beberapa pertimbangan membuatnya tidak melakukan tindakan tersebut. Dia tidak yakin apakah kesetiaan para *tropas* (tentara) Timor pada pemerintahan kolonial lebih kuat dibanding simpati mereka pada salah satu partai yang bersaing. Jika tidak, ada risiko para prajurit Portugis akhirnya akan berperang melawan orang Timor. Konfrontasi antara orang Portugal dan orang Timor tidak saja akan menjadi bencana politik; tetapi bisa juga berakhir dengan kekalahan militer bagi Portugis. Lemahnya kekuatan pasukan Portugis dalam beberapa bulan sebelumnya tidak bisa tergantikan dengan kedatangan 75 pasukan terjun payung untuk memperkuat tentara kolonial.¹⁶⁵

148. Sementara itu, para pemimpin Fretilin mundur ke Aileu, sebuah basis pertahanan Fretilin dan markas pusat pelatihan tentara (*Centro de Instrução*). Pada 13 Agustus di Dili, UDT dan para simpatisannya dalam angkatan bersenjata membentuk sebuah front, Gerakan untuk Persatuan dan Kemerdekaan Rakyat Timor (*Movimento para Unidade e Independência de Timor-Dili*, MUITD), berdasarkan prinsip-prinsip “persatuan, kemerdekaan, dan antikomunisme”. Mereka meramalkan adanya peleburan semua partai prokemerdekaan dan kesetiaan para anggotanya pada MUITD.¹⁶⁶ Dalam dua hari berikut, UDT berhasil meyakinkan kepala polisi,

Magiolo Gouveia, yang berada dalam tahanan UDT, dan banyak warga Timor di bawah komandonya, juga sebagian militer, termasuk kompi-kompi yang berbasis di Baucau dan Lospalos.¹⁶⁷ Pada 16 Agustus, UDT mengeluarkan pernyataan tertulis mengimbau pengusiran semua orang komunis dari wilayah tersebut, termasuk mereka yang berada dalam “Kantor Gubernur Portugis”, pelarangan Fretilin, pembatalan Undang-Undang 7/75, dan dilanjutkannya negosiasi tentang kemerdekaan Timor-Leste. Pada 17 Agustus, yang tampaknya merupakan sebuah konsesi terhadap UDT, kedua orang delegasi MFA, Mayor Mota, kepala Kantor Urusan Politik dan Mayor Jonatas, yang keduanya dituduh oleh UDT (dan pihak Indonesia) sebagai wakil “sayap komunis” di pemerintahan, dikirim ke Lisbon, tampaknya untuk memberi laporan kepada pemerintah pusat tentang perkembangan di Timor-Leste.¹⁶⁸

Kegagalan negosiasi: Konflik bersenjata internal

149. Pada 11 Agustus, dari basis mereka di Aileu, Fretilin memberikan daftar berisi 13 syarat untuk berpartisipasi dalam negosiasi kepada pemerintahan Portugis. Di antaranya adalah pelucutan senjata UDT dan memberikan tanggung jawab keamanan pada para serdadu Timor-Leste, dengan alasan bahwa polisi telah terbukti tidak dapat diandalkan.¹⁶⁹ Pihak Portugis kemudian mengirim Rogério Lobato, serdadu Timor dengan pangkat paling tinggi dalam tentara Portugis, sebagai utusan kepada pimpinan Fretilin. Tetapi ini justru berbalik, dan dia berperan penting ketika kembali ke Dili dan meyakinkan mayoritas serdadu Timor-Leste untuk bergabung dengan pihak Fretilin. Meskipun sebelumnya bersumpah untuk bersikap netral secara politik (*apartidarismo*),¹⁷⁰ tentara Timor-Leste ikut terbawa dalam arus kebebasan politik baru seperti rekan-rekan sipilnya.¹⁷¹ Pada 15 Agustus, Komite Sentral Fretilin di Aileu mengumumkan apa yang mereka sebut “dilanjutkannya perjuangan bersenjata umum melawan semua pengkhianat dan musuh-musuh rakyat”.¹⁷² Pada 20 Agustus, Fretilin melancarkan serangan melawan UDT.

150. Pada 18 Agustus, pegawai pemerintah Portugis yang tersisa telah mundur ke lingkungan Farol, tempat sebagian besar dari mereka tinggal dan yang membentuk pusat zona di Dili yang dinyatakan netral. Pasukan terjun payung Portugis dikerahkan ke zona netral untuk melindungi mereka.

151. Pada pukul 01.00 20 Agustus, Rogério Lobato dan Hermenegildo Alves melancarkan pemberontakan bersenjata Fretilin dengan mengambil alih *Quartel Geral* (markas tentara) di Taibessi dan menahan tentara Portugis yang berada di situ, termasuk wakil kepala staf.¹⁷³ Pada 22 Agustus, pemimpin Fretilin kembali ke Dili. Garis depan konflik di Dili pada awalnya berada di Colmera, tapi pertempuran menyebar ke seluruh kota selama dua minggu berlangsungnya pertempuran tersebut. Komisi menerima kesaksian bahwa senjata tersedia dalam jumlah besar di Dili, dan bahwa kedua pihak membagikannya dengan sembarangan.¹⁷⁴ Dalam konflik bersenjata singkat tersebut para partai politik bersekutu dengan partai lain melalui segala kemungkinan. Mario Carrascalão menggambarkan fenomena ini dalam Audiensi Publik tentang Konflik Internal:

*Kami melihat pendekatan yang berbeda di sana [di distrik-distrik]...
Di Atsabe kami melihat Fretilin bersama dengan UDT melawan
Apodeti. Apodeti di Same berbeda, mereka bersama UDT melawan
Fretilin. Di Dili, Fretilin dan Apodeti melawan UDT.¹⁷⁵*

152. Angka kematian tertinggi terjadi di perdesaan, tempat ketegangan yang bersumber dari pertikaian antarsuku yang sudah lama dan dendam-dendam pribadi, lebih dipicu lagi oleh berbagai perbedaan militan kepertaian, dan meledak menjadi kekerasan.¹⁷⁶ Kekerasan paling hebat terjadi di Liquiçá, Ermera, Ainaro, Manufahi, dan Manatuto, meskipun tidak terbatas di berbagai distrik ini saja.

153. Komisi menerima kesaksian dan pernyataan dari seluruh negeri tentang dampak konflik terhadap rakyat biasa. Kebrutalan rakyat Timor-Leste melawan sesamanya dalam konflik singkat ini telah meninggalkan luka yang dalam pada masyarakat Timor-Leste yang terus dirasakan hingga hari ini. Para anggota UDT bertanggung jawab atas pembunuhan berbagai tahanan Fretilin di sejumlah tempat pada Agustus, setelah semakin jelas bahwa Fretilin semakin memperkuat kekuasaan mereka. Sebanyak 348 pembunuhan selama periode konflik internal telah dilaporkan kepada Komisi. Berdasarkan pada penelitiannya serta pada laporan masa itu dari organisasi seperti ICRC, yang bekerja di Timor-Leste saat itu, Komisi memperkirakan bahwa antara 1.500 dan 3.000 orang terbunuh semasa konflik bersenjata internal. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan dan Penghilangan Paksa; dan Bagian 6: Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia.)¹⁷⁷ Data Komisi menunjukkan bahwa sebagian besar pembunuhan dilaksanakan oleh Fretilin, meskipun pembunuhan massal juga dilakukan oleh UDT (lihat Bab 7.2: Pembunuhan Tidak Sah dan Penghilangan Paksa).^{*} Suatu pembantaian terjadi pada 27 Agustus 1975 di pantai selatan di Wedauberek, Manufahi, tempat para anggota UDT mengeksekusi 11 anggota organisasi pemuda Fretilin, Unetim.¹⁷⁸ Pada 28 Agustus, dengan semakin mendekatnya pasukan Fretilin ke basis pertahanan UDT di Ermera, 20 orang yang ditahan oleh UDT sesudah gerakan bersenjata dibunuh.¹⁷⁹

154. Dalam kesaksiannya kepada Komisi, Xanana Gusmão menjelaskan tanggapan Fretilin sebagai balas dendam atas aksi-aksi yang dilakukan UDT.¹⁸⁰ Rogério Lobato, yang memimpin pasukan bersenjata Fretilin saat itu, mengatakan kepada Komisi bahwa ada beberapa motivasi berbeda untuk kekerasan tersebut :

Kadangkala ini bukan karena mereka memiliki masalah dengan [yang lain] tentang situasi [politik] ini, tetapi dari masalah lama. Saya tahu kadang itu karena mereka merebut pacarnya sehingga sekarang mereka menggunakan kesempatan itu untuk menghajarnya. Saya tahu ini. Orang memanfaatkan perang ini untuk menghajar orang lain dan main hakim sendiri. Tapi sebagian dari mereka memang menghajar [lawannya] karena mereka marah selama perang... Saya ingin mengatakan bahwa

^{*} CAVR telah melaksanakan Survei Tingkat Kematian Retrospektif yang didasarkan pada pengalaman dari 1.396 rumah tangga yang dipilih secara acak di Timor-Leste. Dari survei ini, CAVR mengekstrapolasi perkiraan pelanggaran total untuk 1974 - 1999.

*dalam proses perang ini banyak sekali yang meninggal... memang benar Fretilin membunuh banyak tahanan UDT... UDT juga membunuh para tahanan Fretilin.*¹⁸¹

155. Dalam Audiensi Publik Komisi tentang Konflik Internal, para pemimpin politik UDT dan Fretilin memberi kesaksian bahwa partai mereka tidak memiliki kebijakan untuk membunuh tahanan, atau kekerasan terhadap rakyat sipil, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan kader mereka di seluruh negeri.¹⁸² Namun, Komisi menerima sejumlah kesaksian yang menyatakan adanya keterlibatan para anggota senior kedua partai tersebut dalam pembunuhan, meskipun tidak disertai dengan bukti bahwa partai-partai tersebut mengambil keputusan institusional dalam melakukan kejahatan-kejahatan ini (lihat Bagian 8: Tanggung jawab dan pertanggungjawaban).¹⁸³

156. Orang Timor yang menjadi anggota militer dan polisi Timor Portugis, dan sebagian orang Portugis, tidak berdiri di luar konflik ini. Sementara UDT mendapat dukungan anggota polisi orang Timor (dan beberapa orang Portugis) dan beberapa unit militer, mayoritas pasukan Timor mendukung Fretilin.¹⁸⁴ Dukungan militer ini memungkinkan Fretilin untuk unggul dengan cepat setelah melancarkan pemberontakan bersenjata umum. Pelanggaran prinsip *apartidarismo* ini juga mengakibatkan tersebarnya senjata-senjata api ke tangan partai-partai politik dan pendukung mereka, yang sangat meningkatkan dampak kekerasan tersebut. Di Dili, UDT mundur ke bandar udara, dan pada awal September telah mundur ke barat melalui Liquica ke arah Indonesia.

UDT mundur ke perbatasan

157. Sebagai akibat dari serangan balasan Fretilin, pada September para anggota dan simpatisan partai UDT, Apodeti, Klibur Oan Timor Aswain (KOTA), dan Tralalhistas lari; pertama ke daerah perbatasan Batugade, dan kemudian melintasi perbatasan ke Timor Barat.¹⁸⁵ Kekalahan UDT dan para sekutunya mendorong para pemimpinnya, bagaimanapun enggan, menerima permintaan Indonesia untuk menandatangani petisi yang mengimbau integrasi Timor Portugis ke dalam Indonesia sebagai harga bagi keselamatan perjalanan mereka ke Timor Barat. Jumlah warga Timor-Leste yang dipindahkan ke Timor Barat telah dipertentangkan. Pejabat-pejabat Indonesia saat itu menyebut angka sekitar 40.000 – 50.000 orang.¹⁸⁶ Warga Timor-Leste yang ikut dalam pelarian tersebut menyebut angka yang jauh lebih rendah, sekitar 10.000 sampai 30.000, dan menyatakan bahwa perbedaan antara perkiraan mereka dan perkiraan Indonesia ini karena Indonesia ingin membesarkan angka jumlah pengungsi, baik untuk membesarkan skala dan parahnya konflik internal, ataupun untuk menarik jumlah bantuan internasional yang lebih besar.¹⁸⁷

Tanggapan Portugal terhadap konflik internal

158. Portugal menanggapi konflik internal dengan mengirim utusan ke koloni dari Lisabon. Indonesia menghalangi usaha utusan pertama Kolonel José Gomes untuk sampai ke Dili pada 14 Agustus. Pada 22 Agustus sebuah pesan dari Kantor Kepresidenan di Lisabon sampai ke Gubernur Lemos Pires, memberikan informasi bahwa Menteri Koordinator Antar-Wilayah, Antonio de Almeida Santos, akan tiba di Darwin pada 27 Agustus. Mário Lemos Pires berusaha mengatur gencatan senjata untuk memungkinkan negosiasi. UDT setuju untuk melakukan gencatan senjata terbatas, tapi Fretilin menolak usulan tersebut mentah-mentah.¹⁸⁸ Pada malam hari 26 Agustus, orang-orang yang tersisa dari pemerintahan Portugis meninggalkan Dili menuju Pulau Ataúro, dan tidak pernah kembali.¹⁸⁹

159. Setelah berusaha mencari dukungan ke PBB dan Australia, Almeida Santos tiba di Ataúro pada 28 Agustus. Karena tidak berhasil menghubungi UDT, yang para pemimpinnya saat itu berada di Indonesia, Almeida Santos menghubungi Fretilin dan meminta agar para tahanan Portugis dibebaskan. Fretilin mengabulkan permintaan ini. Tetapi, pada 9 September, Portugal memberi petunjuk kepada Almeida Santos untuk menghindari mengakui Fretilin sebagai satu-satunya wakil rakyat Timor-Leste, salah satu syarat yang ditetapkan Fretilin untuk ikut negosiasi.¹⁹⁰ Pada 22 September, Almeida Santos meninggalkan Ataúro menuju Lisabon. Di sana, dia merekomendasikan negosiasi dengan tiga partai politik utama. Ini menjadi problematis. Karena sudah menguasai sebagian besar Timor-Leste, Fretilin mau bernegosiasi dengan Portugal—namun tidak dengan UDT dan Apodeti. Meskipun terjadi banyak deklarasi dari pertemuan bilateral terakhir antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Portugal, yang diadakan di Roma pada 1 - 2 November, bahwa kedua pihak pemerintah akan bekerja untuk meyakinkan sejumlah partai tersebut tentang perlunya melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah Portugal, Indonesia tidak menunjukkan itikad untuk membiarkan UDT dan Apodeti terlibat dalam pembicaraan seperti itu. Usaha yang terlambat dari Portugal untuk menyertakan negara-negara lain dalam menyelesaikan masalah Timor Portugis juga tidak berbuah. Hari-hari akhir sebelum invasi ditandai dengan satu lagi krisis politik di Lisabon, yang mengakibatkan Portugal tidak lagi memiliki pemerintah yang fungsional. Pada akhirnya, usaha-usaha Portugal yang setengah-setengah ini dilumatkan oleh keputusan Indonesia untuk melancarkan invasi militer skala penuh.¹⁹¹

Tanggapan Indonesia

Partai-partai politik Timor-Leste berada di bawah pengaruh Indonesia

160. Dengan larinya para anggota UDT dan sekutunya—partai Apodeti, Tralabista, dan KOTA—ke daerah perbatasan, atau melintas ke Timor Barat, mereka semakin berada dalam pengaruh kekuasaan militer Indonesia.

161. Selama dan sesaat setelah konflik internal, pada awal September, berbagai kelompok Timor-Leste di Maliana dan Suai melakukan dua proklamasi integrasi dengan Indonesia.¹⁹² Pada 7 September 1975, di Batugade, para pemimpin UDT, KOTA, dan TRABALHISTA mengeluarkan petisi bersama yang ditujukan pada Presiden Soeharto, kembali meminta Timor Portugis untuk diintegrasikan dengan Indonesia.¹⁹³ Mario Carrascalão memberi kesaksian pada Komisi tentang latar belakang penandatanganan Petisi Batugade:

Kami tetap di sana dan setiap hari orang dari Indonesia datang. Louis Taolin [dari Bakin], [Kolonel Aloysius] Sugianto [dari Opsus] selalu datang dan menanyakan kami memerlukan bantuan apa... Apa yang ingin mereka lakukan adalah memanipulasi kami, untuk menandatangani... sebuah petisi yang meminta Indonesia untuk masuk ke Timor... Sebagian orang menandatangani di bawah todongan senjata. Sebagian pergi ke Atambua, dan mereka menandatangani di sana. Kondisinya bagus di sana. Petisi ini kemudian dikirim ke Presiden Soeharto, dan tak lama kemudian Gubernur El Tari memberikan tanggapan pada Senhor [bapak] Francisco Lopes da Cruz. Dia mengatakan bahwa dia setuju untuk memberi kami materi, bahwa tidak perlu khawatir. Ini bukan integrasi, saya melihat ini hanya sebagai fasilitas.¹⁹⁴

Operasi Flamboyan: operasi Indonesia memasuki tahapan baru

162. Pada 31 Agustus, operasi Indonesia dialihkan dari badan intelijen, Bakin, ke sebuah komando militer yang khusus dibuat bernama Komando Tugas Gabungan (Kogasgab). Pengalihan ini menandai perubahan penting dalam operasi-operasi Indonesia di wilayah tersebut, perubahan dari destabilisasi skala kecil ke operasi militer berskala lebih besar.¹⁹⁵

163. Pada akhir Agustus dan September, berbagai unit Pasukan Khusus yang direkrut untuk operasi baru tersebut, yang disebut Operasi Flamboyan, sering melakukan sejumlah penyusupan ke dalam Timor Portugis. Jumlah korban yang tinggi memaksa aktivitas mereka berhenti sejenak.¹⁹⁶ Yang pertama, Tim Susi, dipimpin oleh Kapten Yunus Yosfiah, memasuki Atsabe.¹⁹⁷ Para partisan Timor-Leste bergabung dengan sejumlah tim Pasukan Khusus. Ini merupakan pasukan yang dilatih oleh Indonesia termasuk, contohnya, unit Halilintar João Tavares (lihat Bagian 4: Rezim pendudukan). Mereka diperintahkan untuk menciptakan “teror, [dan] intimidasi.”¹⁹⁸ Pada 14 September, pasukan Fretilin bertempur dengan militer Indonesia dekat perbatasan Atsabe.¹⁹⁹ Pada hari yang sama, militer Indonesia melancarkan serangan-serangan serempak dengan sasaran Bobonaro, Atsabe, dan Suai.²⁰⁰ Kota perbatasan Batugade jatuh pada 8 Oktober, dan pasukan-pasukan Fretilin mundur ke Balibó.²⁰¹

Timor Portugis di bawah administrasi Fretilin

Tinjauan

164. Dengan berakhirnya pertikaian antara Fretilin dan UDT, pada awal September 1975, Fretilin kini berada dalam posisi sebagai penguasa *de facto* Timor Portugis yang tengah menghadapi keadaan darurat. Fretilin tetap menghormati kedaulatan Portugis atas wilayah ini sementara pemerintahan kolonial Portugis tetap tinggal di Pulau Ataúro. Kekurangan dana dan pengalaman pemerintahan, dan dihadapkan dengan kemungkinan krisis kemanusiaan, Fretilin melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mendistribusikan makanan dan memelihara ketertiban masyarakat. Tapi, Fretilin terus menahan tahanan politik dari masa konflik bersenjata yang singkat dan menghadapi kesulitan mencegah berbagai pelanggaran oleh para kadernya sendiri. Sebagai tambahan, tanggapan Indonesia atas kemenangan Fretilin dalam konflik bersenjata internal adalah dengan meningkatkan kegiatan militernya. Mulai September 1975, Indonesia mulai melancarkan penyusupan bersenjata ke wilayah Timor Portugis. Pada Oktober, berbagai penyerangan ini menjadi semakin besar dan sebagai hasilnya Indonesia mampu merebut beberapa kota dekat perbatasan. Selain melakukan perlawanan langsung terhadap kekuatan Indonesia, Fretilin juga berusaha menarik dukungan internasional.

Fretilin mengisi kekosongan

165. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Portugis, Fretilin membentuk administrasi pemerintahan sementara. Selama masa ini, Fretilin terus mengakui kedaulatan Portugis atas Timor-Leste dan berulang kali menyerukan kepada Portugal untuk kembali dan meneruskan proses dekolonisasi yang terputus. Fretilin membiarkan bendera Portugis berkibar di depan kantor gubernur dan membiarkan kantor tersebut kosong.²⁰² Fretilin juga melakukan hal-hal lain untuk memperlihatkan sikap bahwa mereka masih menganggap Portugal sebagai penguasa yang berdaulat, seperti menempatkan penjaga bersenjata di luar Banco Nacional Ultramarino (BNU), bank milik Portugis, yang berfungsi sebagai bank sentral *de facto* selama masa pemerintahan Portugis, dan melarang penggunaan kediaman gubernur untuk bermacam keperluan resmi.²⁰³

166. Selama September Fretilin terus berupaya mendorong Portugal untuk kembali. Pada 13 September Komite Sentral Fretilin mengeluarkan komunike yang menegaskan kembali pengakuannya atas kekuasaan Portugal dan menyerukan dilakukannya negosiasi untuk kembali melanjutkan proses dekolonisasi.²⁰⁴ Fretilin menyatakan bahwa negosiasi harus dilakukan “di dalam wilayah nasional tanpa tekanan dari luar”, dan harus dilakukan hanya dengan Fretilin sebagai pemenang satu-satunya dalam konflik internal. Portugal tidak menerima Fretilin sebagai satu-satunya wakil yang sah dari rakyat Timor Portugis.²⁰⁵ Pada 16 September, menanggapi serangan Indonesia di Atsabe, Fretilin mengeluarkan pernyataan lainnya, yang sekali lagi mengakui kedaulatan Portugis dan menyerukan dilanjutkannya perundingan mengenai dekolonisasi.²⁰⁶

167. Pernyataan-pernyataan ini juga mengusulkan diangkatnya permasalahan Timor-Leste ke kancah internasional dengan melibatkan negara-negara lain di kawasan itu. Fretilin merekomendasikan bahwa sebuah misi pencari fakta, yang terdiri atas negara-negara anggota ASEAN, Australia, Selandia Baru, bersama pengamat dari negara-negara lain, mengunjungi negeri tersebut. Pernyataan 16 September itu juga menyerukan diadakannya sebuah konferensi yang dihadiri oleh perwakilan dari Portugal, Australia, Indonesia, dan Timor-Leste, untuk “menjernihkan kabar burung dan kesalahpahaman”. Fretilin juga merekomendasikan pasukan perdamaian gabungan Indonesia - Timor-Leste untuk melakukan patroli perbatasan gabungan.

168. Pada Oktober, organisasi nonpemerintah dari Australia ACFOA (*Australian Council for Overseas Aid*) mengirim delegasi, yang dipimpin oleh James Dunn, untuk berusaha menyatukan Fretilin, UDT, dan Administrasi Portugis untuk berdialog. Tapi hal ini tidak terjadi, sebagian karena keengganan Portugal untuk bertemu dengan Fretilin maupun UDT.²⁰⁷ Upaya terakhir Fretilin untuk mengajak Portugis dilakukan 25 Oktober, sembilan hari setelah Balibó jatuh ke tangan pasukan Indonesia. Fretilin mengirim undangan kepada pemerintah Portugis di Ataúro untuk mengirim delegasinya ke Dili untuk mengamati situasi di lapangan.²⁰⁸ Seperti sebelumnya, Portugis hanya diam.²⁰⁹

Tahanan dan kekerasan politik

Ekses Fretilin di akhir Agustus menjelang September

169. Selama masa awal penguasaan Fretilin setelah konflik internal, terjadi berbagai ekses seperti kerja paksa, penyiksaan, dan eksekusi.²¹⁰ Sebagian besar pembunuhan yang terjadi di luar pertempuran dilakukan di perdesaan, setelah Fretilin melancarkan aksi balasannya. Kemarahan publik sering berubah menjadi kekerasan yang mematikan. Selama masa ini, pembunuhan oleh orang-orang yang terkait dengan Fretilin kadang terjadi akibat perseteruan lokal yang mendalam ketimbang politik.²¹¹ Presiden Fretilin kala itu, Francisco Xavier do Amaral, menjelaskan kepada Komisi bahwa ketika itu:

Ada banyak kebingungan. Semuanya naik pitam, darah mereka mendidih, dan karenanya orang-orang saling menyerang. Kekerasan terjadi. Kemenangan satu pihak akan menimbulkan pembalasan dari pihak lain. Inilah yang terjadi pada 1975... Contohnya, beberapa orang dipecat dari pekerjaannya. Mereka melakukan pembalasan kepada atasan mereka, ketika muncul kesempatan... Pihak yang satu memukul dan membunuh pihak yang lain. Dan karena itu siklus kebencian berlanjut.²¹²

170. Banyak pembunuhan balas dendam terjadi di Distrik Ermera, sebuah basis UDT. Sebuah kesaksian dari Ermera mengatakan bahwa:

Pada 15 September 1975, [tiga] komandan milisi Fretilin... menangkap tujuh orang UDT... di desa Katrai Kraik, Letefoho, Ermera. Ketujuh orang tersebut dibawa ke Germano, Desa Katrai Leten, dan dibunuh. Kepala desa Lauana menyaksikan pembunuhan tersebut.²¹³

171. Seperti yang dikatakan para pemimpin Fretilin dalam kesaksiannya kepada Komisi, kenyataan bahwa senjata yang dirampas selama konflik tersedia dengan mudah, memperburuk situasi kekerasan.²¹⁴

Penjara Fretilin dan Komisi Penyelidikan

172. Selama masa konflik internal, Fretilin menangkap dan menahan 2.000 tahanan.²¹⁵ Sebagian besar adalah anggota UDT, namun ada juga anggota Fretilin, yang ditahan karena apa yang mereka sebut sebagai eksekusi selama konflik.²¹⁶ Posisi resmi Fretilin adalah bahwa mereka menahan orang-orang sampai pemerintahan Portugis kembali untuk mengadili mereka. Namun ketika harapan kembalinya Portugal semakin pupus, Fretilin memutuskan untuk menangani situasi tersebut sendiri. Pada 30 September Fretilin mengumumkan didirikannya sebuah Komisi Penyelidikan (*Comissão de Inquérito*) untuk memisahkan para pemimpin dari para anggota partai yang tidak terlibat.²¹⁷ Komisi Penyelidikan mengundang rakyat untuk memberi kesaksian dalam menentukan kesalahan tertuduh di sejumlah “pengadilan” umum. Metode peradilan seperti ini cenderung menghasilkan hukuman yang sewenang-wenang. Seorang mantan tahanan yang ditahan Fretilin, Monis da Maia, menggambarkan pengalamannya:

Semua penduduk kampung diperintahkan untuk pergi ke pos militer dan para tahanan dibawa keluar satu demi satu dan “diadili”. Tahanan-tahanan yang dituduh melakukan kejahatan berat dibawa ke Aileu. Ketika tiba giliran saya, semua orang berdiam diri sampai H1 mulai memancing-mancing mereka. Ia menyuruh mereka mengatakan bahwa saya telah memukul mereka. Orang-orang itu menolak kecuali satu orang yang berkata, “Ia memaki kakek saya.” Karena ini saya dibawa ke Aileu, dituduh memaki kakek seseorang.²¹⁸

173. Fretilin memindahkan para pemimpin regional UDT ke Dili atau Aileu untuk diperiksa oleh komisi.²¹⁹ Di Aileu, para pemimpin UDT ditahan di gedung Companhia di Aissirimou, dan para anggota partai biasa ditahan di sebuah gudang besar.²²⁰ Penduduk diperkenankan melampiaskan kemarahan mereka kepada para tahanan yang baru datang:

Mayor Lorenço yang paling parah dipukuli saat ia tiba di Aileu karena ia adalah komandan. Mereka meletakkannya di atap mobil [yang ditumpangi saat dia datang] dan membawanya keliling Aileu dan mereka berteriak “Viva Fretilin”. Seseorang menemukannya dan ia berdarah. Wajahnya bengkak dan ia tidak dapat berbicara.²²¹

174. Para pemimpin UDT yang tertangkap, termasuk Wakil Presiden Partai, César Mouzinho, mendapat perlakuan yang paling buruk.²²² Tapi, para mantan tahanan bersaksi bahwa pemukulan dan penganiayaan adalah hal yang biasa, contohnya ketika seorang penjaga Fretilin memaksa para tahanan untuk baku-pukul di depan umum, seperti mengadu ayam.²²³

175. Selama masa pemerintahannya, Fretilin mengizinkan anggota ICRC (Komite Palang Merah Internasional) untuk mengakses berbagai penjaranya. Para pengamat Australia yang mengunjungi berbagai penjara Fretilin pada 1975 mengonfirmasikan bahwa beberapa tahanan dipukuli, termasuk mantan kepala polisi, Letnan Kolonel Magiolo Gouveia, walaupun mereka menyimpulkan bahwa secara umum, para tahanan dalam keadaan sehat dan diperlakukan dengan baik.²²⁴

176. Para anggota senior Fretilin yang bersaksi di hadapan Komisi mengakui bahwa selama masa itu anggota-anggota Fretilin melakukan penganiayaan terhadap para tahanan. Rogério Lobato, yang ketika itu menjabat kepala Angkatan Bersenjata Fretilin, mengatakan kepada Komisi:

Sering kali mereka [Fretilin] memasuki penjara, mengejek para tahanan dan memukuli para tahanan tersebut... Orang-orang mengambil keuntungan dari konflik ini untuk memukuli orang lain dan untuk main hakim sendiri. Namun beberapa memang memukuli mereka karena marah pada mereka sehubungan dengan konflik ini.²²⁵

177. Pada Oktober 1975, ketika serangan penyusupan Indonesia dimulai kembali, Fretilin menahan beberapa anggota Apodeti. Mari Alkatiri mengatakan kepada Komisi bahwa ia memerintahkan penahanan mereka setelah ia menerima informasi intelijen bahwa Apodeti tengah merencanakan kudeta melawan Fretilin, yang akan dimulai dengan melempar granat di tengah-tengah pertemuan Komite Sentral Fretilin.²²⁶ Ini mungkin juga dipicu oleh penyusupan militer Indonesia di perbatasan.²²⁷ Banyak tahanan Apodeti dibunuh setelah invasi Indonesia.

178. Tidak ada bukti bahwa perlakuan buruk atas tahanan selama September sampai awal Desember merupakan kebijakan resmi Fretilin. Walaupun dalam beberapa kasus anggota senior Fretilin turun tangan untuk menghentikan penganiayaan,²²⁸ jelas bahwa Komite Sentral Fretilin mengetahui situasi ini dan tidak mengambil langkah yang cukup untuk mencegah malpraktik ini atau berupaya untuk mengendalikannya.²²⁹

Memulihkan ketertiban

179. Pada awal September, setelah menguasai sebagian besar wilayah, Fretilin mulai bergerak untuk memulihkan ketertiban.²³⁰ Mereka mengambil berbagai langkah keras untuk mencapai maksud ini. Beberapa orang asing yang mengunjungi sejumlah penjara Fretilin menyaksikan para serdadu Fretilin yang dipenjara karena melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil.²³¹ Sampai awal September,

Fretilin menguasai seluruh wilayah Timor-Leste kecuali wilayah Batugade, wilayah perbatasan dengan Indonesia. Dua anggota Parlemen Australia membuat penilaian berikut ini setelah mengunjungi beberapa kota:

Kunjungan kami keliling negeri membenarkan klaim Fretilin bahwa situasi telah terkendali. Di wilayah-wilayah yang kami kunjungi sendiri, kami menerima informasi dari pekerja kemanusiaan dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) bahwa mereka juga berpendapat sama.²³²

Pemerintahan

180. Selama masa konflik internal, 80% dari 3.000 tenaga ahli Timor dan staf asing pemerintahan Portugis telah meninggalkan negeri ini. Tidak ada kemungkinan untuk meyakinkan mereka kembali dan bekerja di bawah pemerintahan Fretilin. Fretilin memperluas keanggotaan Komite Sentral dengan mengangkat sejumlah besar perwakilan regional dan anggota militer aktif, yang mencerminkan pengaruh militer pasca-konflik-internal dan perlunya perwakilan geografis yang lebih luas.²³³ Untuk mengatasi kekosongan pemerintahan di luar Dili ini, Fretilin mengangkat Komite-Komite Regional untuk memerintah di setiap distrik. Pada pertengahan September, Fretilin membentuk Komite Eksekutif untuk menjalankan pemerintahan sementara.²³⁴ Komite ini terdiri atas 13 departemen, antara lain departemen urusan ekonomi, kesehatan, dan militer.²³⁵ Pada Oktober, Fretilin membentuk serangkaian komisi untuk memfasilitasi pemerintahan di wilayah ini. Satu komisi yang utama adalah Komisi Pengelolaan dan Pengawasan Ekonomi, yang diketuai oleh José Gonçalves, mungkin satu-satunya ahli ekonomi yang masih berada di wilayah ini. Diresmikan pada 11 Oktober 1975, komisi ini bertindak sebagai wakil Fretilin dalam manajemen pusat pemulihan ekonomi negeri ini. Komisi ini juga bekerja dengan Komite-Komite Regional Fretilin dan LSM-LSM asing dalam pendistribusian bantuan makanan darurat, menggunakan aset-aset perusahaan niaga dan logistik semipemerintah, SAPT (*Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho*).²³⁶

181. Gangguan terhadap sistem produksi dan distribusi akibat konflik internal dan ketidakmampuan Timor-Leste untuk memenuhi kebutuhannya sendiri²³⁷ mengakibatkan krisis ekonomi perkotaan di mana Fretilin, dengan sejumlah dukungan lembaga-lembaga internasional, mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Walaupun kekerasan memengaruhi beberapa kota yang lebih besar di wilayah tengah dan barat, dan pertikaian-pertikaian kecil menyebar luas, sebagian besar wilayah perdesaan luput dari konflik bersenjata yang menelan Dili. Warga perdesaan Timor umumnya bergantung pada pertanian subsisten untuk penghidupannya, sehingga tidak menjadi bagian dalam ekonomi tunai yang menjadi sandaran warga Timor-Leste perkotaan.²³⁸ ICRC melaporkan akibat politik internal:

*Kerusakan dari perang hanya memengaruhi beberapa wilayah: Maubisse, Ainaro, Ermera, Same... [kekurangan makanan] pada dasarnya akan memengaruhi populasi perkotaan tapi tidak akan memengaruhi populasi perdesaan di mana orang-orang... hidup di dalam sistem ekonomi subsisten.*²³⁹

182. Satu cara yang digunakan Fretilin untuk mengatasi kelangkaan makanan ini adalah dengan memaksa para tahanan UDT untuk melakukan kerja paksa.²⁴⁰ Satu tempat di mana ini terjadi adalah di perkebunan di Aissirimou, Aileu.²⁴¹

183. Sesudah menguasai keadaan, Fretilin sadar bahwa Fretilin tidak memiliki sumberdaya untuk mengimpor makanan. Pada 13 September, Fretilin mengeluarkan permintaan untuk memohon bantuan makanan darurat. ICRC dan ACFOA (Australian Council for Overseas Aid) menanggapi hal ini dengan sedikit pasokan makanan, tapi tidak ada pemerintah manapun yang memberi bantuan selama masa ini. Fretilin kemudian menyerukan kepada orang-orang yang lari dari perdesaan ke kota selama konflik internal untuk kembali ke desa mereka masing-masing. Selain meningkatkan produksi pertanian, hal ini juga mengurangi jumlah orang yang akan bergantung pada pasokan pangan kota yang terbatas. Mengantisipasi ancaman kekurangan makanan, Fretilin berencana untuk menerapkan penjatahan makanan pada Desember, dan mulai melakukan sensus untuk dapat menjalankan suatu sistem penjatahan (lihat Bab 7.3.: Pemandahan Paksa dan Kelaparan).

184. Penutupan BNU dan kemustahilan untuk segera mendirikan sistem perbankan alternatif, yang memang bukan keahlian Fretilin,²⁴² tetap menjadi masalah selama pemerintahan Fretilin. Ketiadaan valuta asing berakibat benar-benar melumpuhkan kemampuan wilayah ini untuk menghidupkan kembali ekonomi tunai atau untuk menjalankan perdagangan internasional.* Apapun yang tersisa dari komunitas pedagang Cina mampu untuk sedikit memompa ekonomi. Namun, banyak yang telah meninggalkan perdesaan untuk datang ke Dili dan kota-kota lainnya atau telah pergi ke luar negeri, dengan membawa serta modalnya. Kemerosotan nilai matauang memaksa Fretilin untuk membayar pegawai negeri dengan barang ketimbang uang tunai. Walau ada semua faktor negatif ini, kegiatan ekonomi mulai sedikit kembali ke pasar-pasar di Dili dan toko-toko Cina selama Oktober dan November.²⁴³

185. Pendidikan merupakan bidang penting dalam kebijakan Fretilin. Fretilin telah melakukan banyak sebelum terjadi konflik internal dengan mengembangkan program melek huruf yang diilhami oleh pendidik Brasil, Paulo Freire.† Setelah konflik internal, sistem pendidikan yang ada benar-benar lumpuh. Seperti halnya di bidang-bidang pemerintahan lainnya, sebagian besar personil yang cakap telah pergi. Baik sekolah-sekolah negeri maupun yang dijalankan Gereja tutup, yang terakhir ini tutup karena banyak suster dan pastor yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut juga pergi, sehingga membuat Francisco Xavier do Amaral berkomentar:

Sungguh disesalkan bahwa para “gembala” pergi ketika “domba-domba” memerlukan bimbingan mereka.²⁴⁴

* Kapal bantuan ACFOA berangkat dengan membawa kopi ke Australia. Namun, uang yang didapat harus disimpan di bank di Darwin.

† Sistem pendidikan masyarakat terutama ditujukan untuk memecahkan persoalan tingkat melek huruf yang rendah, yang dikembangkan oleh Paulo Freire, seorang pendidik Brasil.

186. Para guru yang tinggal dialihtugaskan sebagai serdadu Falintil atau sebagai pegawai pemerintah; kemampuan membaca mereka amat dibutuhkan.²⁴⁵ Walaupun ada rencana membuka kembali sejumlah sekolah dasar pada November, dengan menggunakan siswa sekolah menengah atas sebagai guru, hal ini tidak terjadi dan sekolah-sekolah tetap tutup.

187. Konflik internal telah mengakibatkan ratusan orang terluka, baik anggota militer maupun warga sipil. Dokter-dokter Portugis telah ditarik mundur pada 26 Agustus, walaupun sebagian besar pekerja kesehatan Timor terus bekerja tanpa gangguan.²⁴⁶ Masih cukup banyak pasokan obat-obatan di Dili, dan fasilitas medis mencukupi walaupun sederhana. Dengan perlengkapan dasar ini, dan dibantu oleh kedatangan sejumlah dokter dari ICRC dan sebuah NGO Australia, ASIAT (Australian Society for Inter-Country Aid), pada 1 September, Rumah sakit Dili terus buka. Walaupun ASIAT berencana untuk membuka berbagai sekolah pelatihan medis—dan selama masa ini Fretilin juga membuka sekolah perawat kesehatan di Aileu pada Agustus 1974—di luar Dili pelayanan kesehatan terbatas.²⁴⁷

188. Jelas bahwa antara September dan Desember 1975, Fretilin melakukan upaya sungguh-sungguh untuk membangun pemerintahan interim yang tepercaya di seluruh wilayah Timor-Leste tanpa kehadiran Portugal, sementara tetap menanti kembalinya Portugal untuk menuntaskan proses dekolonisasi. Terbentur oleh kurangnya kemampuan keuangan dan administrasi, dan dalam konteks ketidakstabilan politis akibat konflik politik Agustus serta peningkatan operasi militer lintas-batas oleh pasukan bersenjata Indonesia, pemerintahan yang baru lahir ini menghadapi tekanan yang luarbiasa.

Balibó : Indonesia meningkatkan intensitas operasi militer

189. Pada 15 Oktober, Tim Susi dan batalion-batalion dari Brigade Infanteri Kedua ABRI melancarkan serangan ke Balibó, di mana lima wartawan internasional terbunuh. Para wartawan tersebut tengah meliput berita mengenai berbagai operasi militer Indonesia di dalam Timor Portugis. Tiga wartawan Australia dan dua wartawan Inggris yang bekerja untuk Televisi Australia ditembak atau ditikam dalam keadaan yang ditutup-tutupi oleh pejabat militer Indonesia ketika itu. Satu kemungkinan alasan atas eksekusi para wartawan itu adalah bahwa mereka menyaksikan besarnya skala operasi Indonesia di sekitar Balibó, yang jauh lebih besar dari penyusupan-penyusupan sebelumnya (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).²⁴⁸

190. Pada 16 Oktober, ketika militer Indonesia menguasai Balibó dan Maliana, garis depan Fretilin pindah ke Atabae dan Bobonaro.²⁴⁹ Komisi memiliki rekaman film dari operasi-operasi militer Indonesia ini, yang memperlihatkan penggunaan kapal

.....
* Meskipun hal ini diketahui pemerintah Australia dengan segera, tidak ada protes internasional atau seruan untuk diadakan penyelidikan. Memang, Pemerintah Australia tampaknya tidak memprotes baik secara diam-diam kepada pemerintah Indonesia tentang pembunuhan tersebut. Ini tetap menjadi masalah antara Indonesia dan Australia selama masa-masa pendudukan.

perang untuk membombardir posisi Fretilin dan pendaratan pesawat di Maliana, sesuatu yang jelas merupakan penyerangan besar-besaran.²⁵⁰ Tidak seperti serangan di bulan Agustus atas Atsabe yang menggunakan pasukan Partisan untuk mendukung unit-unit Pasukan Khusus, serangan atas Balibó tidak banyak menggunakan orang Timor.²⁵¹ Walaupun demikian, Indonesia berusaha menyalahkan sekutu UDT/Apodeti mereka atas kematian para wartawan tersebut. Secara umum, pihak berwenang Indonesia berulang kali menyangkal bahwa pasukan-pasukan mereka terlibat secara militer di Timor Portugis pada September - November. Sebaliknya mereka menyatakan bahwa bentrokan apapun terjadi akibat para “Partisan” Timor-Leste yang berupaya menangkis serangan-serangan ke dalam wilayah Indonesia.

191. Selama Oktober, pasukan-pasukan lain yang dipimpin Kopassandha melancarkan serangan, dan berharap untuk menjangkau lebih jauh ke dalam. Mereka menemui perlawanan yang sengit dan berhasil diusir kembali. Laporan harian CIA, *National Intelligence Daily*, melaporkan bahwa pada 20 Oktober serangan Indonesia “terhenti karena Jakarta gagal menguasai kota perbatasan Lebos”.²⁵² Tanpa perlindungan artileri laut di wilayah yang dekat dengan pantai, pasukan penginvansi Indonesia menemui kesulitan di wilayah pedalaman di mana kedua pihak lebih berimbang kekuatannya. Menurut Albino do Carmo, komandan Falintil/Fretilin, penyerangan tersebut terjadi:

*...Di [desa] Lela, berbatasan dengan Lamaknen, di daerah yang disebut Bulubulu. Saat itu kira-kira bulan Oktober, sekitar pertengahan bulan. Ada banyak orang di sana, mereka menembakkan mortir ke sini. Mereka memiliki senapan mesin, ada dua. Ada banyak orang. Kami lihat dari kejauhan. Ada informasi bahwa [mereka] dari Menpur. Lebih dari 100 [orang]. Kami tidak bisa melihat di belakang [mereka]. Mereka tidak bisa maju karena...tidak bisa ke depan karena kami menembaki mereka. Kami pun punya senapan mesin dan mortir. Saya punya 20 anak buah saat itu.*²⁵³

192. Pasukan Fretilin secara tak terduga memberi perlawanan sengit terhadap pasukan Indonesia, yang juga bermasalah dengan persenjataannya dan dihambat oleh permulaan musim hujan. Setelah jeda sejenak, operasi tersebut dimulai kembali pada 20 November dengan sebuah operasi yang diarahkan ke Atabae. Untuk pertama kalinya Pasukan Indonesia mendapatkan dukungan laut dan udara. Pada 27 November Atabae, yang dipertahankan oleh kompi kavaleri Portugis orang Timor-Leste yang loyal terhadap Fretilin, jatuh ke tangan penyerbu.²⁵⁴ Militer Indonesia kini sudah bersiap untuk melancarkan invasi besar-besaran ke Dili.

Deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin, dan tanggapan terhadapnya

Tinjauan

193. Dengan semakin gencarnya operasi militer Indonesia dan invasi besar-besaran tampak semakin pasti, Fretilin semakin perlu mencari cara untuk melibatkan komunitas internasional.

194. Pada awal November 1975, Portugal mengadakan pembicaraan bilateral dengan Indonesia di Roma. Dalam pernyataan pers bersama setelah pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan kembali komitmen mereka kepada dekolonisasi Timor Portugis yang teratur dan setuju untuk bekerja dan menyelenggarakan perundingan antara Portugal dan semua partai politik Timor. Dengan pasukan Indonesia yang sudah menduduki bagian yang cukup besar dari wilayah tersebut dan pemerintahnya selalu menghalang-halangi terjadinya pembicaraan antar-semua pihak, pertemuan Roma tersebut gagal untuk mempertimbangkan realitas situasi di lapangan.

195. Fretilin memutuskan untuk melakukan deklarasi kemerdekaan sepihak tak lama setelah pasukan Indonesia menduduki kota Atabae di bagian barat. Fretilin melakukan ini pada 28 November 1975. Fretilin membentuk pemerintahan dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk mencegah invasi besar-besaran yang akan terjadi.

196. Anggota empat partai politik Timor-Leste lainnya berkumpul di Bali. Pada 29 November, di bawah tekanan intelijen Indonesia, untuk membalas deklarasi sepihak Fretilin, mereka menandatangani apa yang disebut “Deklarasi Balibó”, yang mendeklarasikan “kemerdekaan dan integrasi” Timor Portugis ke dalam Indonesia. Portugal tidak mengakui kedua deklarasi tersebut. Indonesia bersiap untuk invasi besar-besaran.

Latar belakang deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin

197. Mantan Presiden Fretilin Francisco Xavier do Amaral mengatakan kepada Komisi tentang dilema yang dihadapi Fretilin saat Pemerintah Kolonial Portugis tetap tinggal di Ataúro.

Dari sudut pandang Fretilin, kebijakannya untuk terus mengakui kedaulatan Portugal tanpa ada tanda-tanda apapun dari Portugal bahwa mereka berniat menjalankan kewenangan itu, adalah suatu kebijakan yang berbahaya untuk dijalani. Walaupun sebagai penguasa de facto, Fretilin tidak memiliki legitimasi internasional sebagai penguasa. Fretilin bukan pemerintah yang dipilih dan ketakutannya adalah bahwa kekosongan politik ini akan memberikan dalih bagi Indonesia untuk melancarkan invasi besar-besaran ke Timor-Leste.²⁵⁵

198. Undanguan Fretilin tanggal 25 Oktober kepada pemerintahan Portugis di Atauro untuk mengirim delegasi ke Dili untuk melakukan penilaian situasi politik tidak mendapat tanggapan. Posisi Fretilin semakin mengeras ketika mengetahui terjadinya pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Portugal dan rekannya Menteri Luar Negeri Indonesia di Roma pada 1 - 2 November. Pernyataan pers bersama para Menteri Luar Negeri tersebut menyerukan dipulihkannya ketenteraman dan ketertiban sebagai syarat bagi proses dekolonisasi, akan tetapi samasekali tidak menyebutkan masuknya pasukan Indonesia jauh ke dalam wilayah Timor Portugis. Ketika diadakan pembicaraan di Roma, dan setelah kejatuhan Balibó dan Maliana ke pihak pasukan Indonesia pada 16 Oktober, garis depan Fretilin telah mundur ke Atabae dan Bobonaro.²⁵⁶

199. Bagi sebagian orang di Fretilin, kegagalan pembicaraan Roma merupakan pukulan terakhir. Ketika diwawancarai pada 2004, Francisco Xavier do Amaral menyatakan bahwa pemerintah Portugal telah mengkhianati rakyat Timor-Leste:

*Portugal dan Indonesia sudah setuju bahwa Indonesia tidak akan campur tangan dalam urusan Timor-Leste. Tapi pada akhirnya siapa yang turut campur? Indonesia. Dan apa yang dikatakan Portugal? Tidak ada. Mereka hanya berdiam diri. Bahkan tidak ada peringatan untuk Indonesia. Fretilin sudah cukup lama menunggu kesempatan untuk memulai negosiasi dengan Portugal, tapi mereka tetap diam, tidak menjawab. Apa sebenarnya alasan bagi penundaan-penundaan ini? Untuk membela kita atau mengkhianati?*²⁵⁷

200. Fretilin kini harus menghadapi tiga kenyataan pahit: ancaman luar yang amat besar dari tetangganya yang besar di perbatasan maupun di wilayahnya, ekonomi yang tidak memiliki infrastruktur administrasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari, dan ketidakpedulian Portugal. José Gonçalves, ketua Komite Ekonomi dan Pengawas Fretilin, ditugaskan menghidupkan kembali ekonomi yang lumpuh. Ia menyatakan pada Oktober 1975:

*“Sekarang karena pemerintah Portugis sudah tidak ada dan negosiasi terus berjalan, kita harus mulai merencanakan untuk merdeka.”*²⁵⁸

201. José Gonçalves menyadari bahwa pemulihan ekonomi domestik dan perdagangan internasional tidak akan mungkin terjadi apabila BNU, satu-satunya bank di Timor Portugis, tidak buka kembali. Sebaliknya, apabila Fretilin terus mengakui pemerintahan Portugis sebagai penguasa yang sah di Timor-Leste, bank tersebut tidak bisa buka kembali. . Gonçalves menyatakan:

*Kita tidak bisa seterusnya menunggu bank ini berfungsi kembali. Bank ini sudah dinasionalisasi dan kita bermaksud untuk menyelesaikan proses ini.*²⁵⁹

202. Pada November, Fretilin mengirim delegasi ke Afrika untuk menggalang dukungan bagi deklarasi kemerdekaan sepihak.* Delegasi tersebut terdiri atas dua anggota penting Komite Sentral Fretilin, Mari Alkatiri dan César Mau Laka. Mereka kembali ke Dili pada minggu ketiga November dan menyatakan bahwa 25 negara berjanji untuk memberi pengakuan apabila Timor-Leste mendeklarasikan kemerdekaan, di antaranya Cina, Uni Soviet, Zambia, Mozambik, Tanzania, Guinea-Bissau, Angola, Cabo Verde, São Tome dan Principe, Korea Utara, Vietnam Utara dan Selatan, Kamboja, Rumania, Belanda, Jerman Timur, Swedia, Aljazair, Kuba, Norwegia, dan Brasil (lihat Bab 7.1.: Hak penentuan nasib sendiri).²⁶⁰

203. Terlebih lagi, ancaman militer Indonesia semakin jelas, dan Fretilin mulai menumpuk senjata dan makanan di pedalaman untuk mengantisipasi invasi besar-besaran.²⁶¹ Fretilin juga mengambil langkah untuk memperbesar angkatan bersenjata. Walaupun pasukan Falintil tengah berperang di perbatasan dan sampai saat itu berhasil menahan tentara Indonesia, kemungkinan Falintil dilumpuhkan dalam suatu invasi besar-besaran cukup besar. Untuk mengantisipasi hal ini, Falintil mulai melatih dan mempersenjatai kelompok-kelompok milisi (*Milicia Popular de Libertacao Nacional*, Miplin).²⁶²

204. Bungkamnya komunitas internasional dan kegagalan Portugal untuk berkomunikasi dengan Fretilin setelah serangan 16 Oktober atas Balibó mulai membuat Fretilin yakin akan keterasingannya. Walaupun opini terpecah, pada minggu ketiga November 1975, tak lama setelah Mari Alkatiri dan César Mau Laka kembali dari Afrika, Komite Sentral Fretilin memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan.²⁶³ Keputusan ini menjadwalkan deklarasi pada 1 Desember, hari Portugal merayakan kemerdekaannya dari penjajahan Spanyol.²⁶⁴

Deklarasi kemerdekaan

205. Pada 26 November, setelah dua minggu pengeboman gencar dari laut dan udara, Atabae jatuh ke tangan pasukan bersenjata Indonesia. Komite Sentral menyimpulkan bahwa invasi besar-besaran sudah di ambang pintu. Dalam wawancaranya dengan Komisi pada 2004 Mari Alkatiri mengingat kata-kata wakil presiden Fretilin, Nicolau Lobato, kepada Komite Sentral:

*Pasukan Indonesia sudah masuk di Atabae... Mereka sudah menduduki Atabae! Kalau kita tunggu sampai 1 Desember, kita tidak akan punya waktu untuk mendeklarasikan kemerdekaan di Dili. Jadi sebaiknya kita proklamasikan kemerdekaan hari ini.*²⁶⁵

206. Walaupun ada penentangan terhadap keputusan mendeklarasi kemerdekaan, pada Jumat sore 28 November 1975, Fretilin membacakan deklarasi kemerdekaan

* Sebelumnya, pada akhir September konferensi negara-negara Asia - Afrika yang diselenggarakan di Maputo, ibukota Mozambik memutuskan untuk "mendukung secara penuh perjuangan kemerdekaan yang dipimpin oleh Fretilin." Resolusi ini diusulkan oleh Presiden Mozambik Samora Machel dan mendapat dukungan dari negara peserta.

di hadapan 2.000 orang yang berkumpul di depan gedung pemerintahan Portugis.²⁶⁶ Pasukan Falintil berparade mengenakan seragam loreng dan ikat kepala berwarna sesuai satuan-satuan mereka.²⁶⁷ Francisco Xavier do Amaral datang dengan mobil Mercedes-Benz hitam, mobil resmi gubernur Portugis. Pada pukul 17.55 bendera Portugis, yang telah berkibar di Timor-Leste selama berabad-abad, diturunkan. Fretilin mengibarkan bendera baru Republik Demokratik Timor-Leste—merah, hitam, dan kuning dengan bintang putih—dan hening cipta selama satu menit dilakukan untuk mengenang “semua orang yang telah gugur dalam beberapa bulan terakhir ini dan selama perang-perang anticolonial di Timor-Leste”.²⁶⁸ Sebuah meriam ditembakkan 20 kali sebagai tanda penghormatan bagi yang meninggal. Pemimpin Fretilin, Francisco Xavier do Amaral, kemudian membacakan proklamasi kemerdekaan:

Dengan menyatakan kehendak mulia rakyat Timor-Leste dan untuk melindungi kedaulatan nasional yang sangat sah secara hukum, Komite Sentral Fretilin secara sepihak memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Timor-Leste. Mulai tengah malam nanti, [kami] menyatakan [kelahiran] suatu bangsa yang anticolonial dan antiimperialis, negara Republik Demokratik Timor-Leste.

Hidup Republik Demokratik Timor-Leste!

Hidup Timor-Leste yang bebas dan merdeka!

Hidup Fretilin!

207. Setelah proklamasi, para hadirin menyanyikan *Pátria! Pátria!* (Tanah Air! Tanah Air!), dan mendeklarasikan lagu ini sebagai lagu kebangsaan. Timor-Leste kemudian menyiarkan berita deklarasi kemerdekaannya kepada dunia dari Pusat Komunikasi Marconi.²⁶⁹

208. Walaupun Fretilin telah merencanakan melakukan deklarasi kemerdekaan 1 Desember, deklarasi kemerdekaan sepihak 28 November terjadi secara tak terduga dan tiba-tiba. Beberapa hal mengonfirmasikan ini, termasuk penulisan proklamasinya²⁷⁰ dan penjahitan benderanya²⁷¹ pada sore hari 28 November. Tidak semua pemimpin Fretilin hadir pada upacara proklamasinya.²⁷² Sekretaris Jenderal Fretilin, Alarico Fernandes, dan sekretaris urusan luar negeri, José Ramos-Horta, berada di Australia sejak 20 November untuk menggalang dukungan politik, sementara Juvenal Inacio (Sera Key) dan Vicente Reis (Sa’he) tengah memerangi pasukan Indonesia di perbatasan.

209. Keesokan harinya, 29 November, Komite Sentral Fretilin menunjuk Francisco Xavier do Amaral sebagai presiden republik baru ini. Dalam pidato pengangkatannya, Xavier do Amaral menekankan bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh rakyat Timor-Leste. Ia mengatakan bahwa kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari kelalaian dan pengingkaran hak tersebut selama proses dekolonisasi pemerintah Portugis. Xavier do Amaral menegaskan:

Setelah 400 tahun penderitaan, kelaparan, pemiskinan, pengabaian, dan pembantaian, apa lagi yang kita tunggu? Kawan-kawan, baik atau buruk, kita harus menjadi orang yang pertama dan yang terakhir untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Jadi mulai hari ini, kita semua, ya kita semua, akan membangun bangsa kita, Timor-Leste.²⁷³

210. Menteri Pertahanan, Rogério Lobato, membacakan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Konstitusi, yang terdiri atas 55 pasal, ditulis hanya beberapa hari sebelum 28 November 1975.²⁷⁴ Pada 1 Desember, Dewan Menteri diangkat di kediaman Gubernur Portugis di Lahane. Komite Sentral Fretilin menunjuk Wakil Presiden Fretilin, Nicolau Lobato, sebagai Perdana Menteri.

211. Konstitusi RDTL tersebut memasukkan pasal-pasal yang menetapkan Timor-Leste untuk melakukan hal-hal berikut:

- Penghapusan struktur-struktur kolonial dan menciptakan masyarakat baru yang terbebas dari segala jenis dominasi dan pemerasan (Pasal 2)
- Kebijakan-kebijakan pembangunan yang terfokus pada pembangunan pertanian dan industri (Pasal 6)
- Melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi terencana (Pasal 10)
- Memerangi buta huruf dan ketidaktahuan, melindungi dan mengembangkan budayanya (Pasal 12)
- Mengembangkan dan menjalankan sebuah sistem kesehatan (Pasal 13)
- Menjamin kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan (Pasal 14)
- Menjamin kebebasan beragama (Pasal 15)
- Mengembangkan “hubungan kerjasama dan bersahabat” dengan “kekuatan-kekuatan dunia yang demokratis dan progresif, yang dianggap sebagai sekutu alamiah” (Pasal 16)
- Menjamin hak untuk ikut serta di dalam proses-proses konsolidasi demokratis (Pasal 23)
- Menjamin kebebasan untuk berpikir, berasosiasi, berserikat, dan berbicara (Pasal 24)
- Menjamin hak untuk memilih dan dipilih di dalam pemilihan umum (Pasal 25)
- Menjamin hak untuk bekerja, mendapat pendidikan, dan kesehatan (Pasal 27).

212. Konstitusi RDTL menetapkan sistem pemerintahan semipresidensial. Perdana Menteri adalah kepala Dewan Menteri (Pasal 40) yang bertugas menjalankan pemerintahan. Presiden adalah Kepala Negara (Pasal 42) dan Panglima Angkatan Bersenjata (pasal 4). Presiden diberi wewenang untuk menunjuk dan memecat Perdana Menteri, Ketua Mahkamah Agung, dan Gubernur Bank Timor-Leste (Pasal 42). Nicolau Lobato, yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri, menyusun daftar menteri dan wakil menteri, dan mengajukannya kepada Presiden dan Komite Sentral Fretilin untuk disahkan.²⁷⁵

Reaksi atas deklarasi kemerdekaan

Deklarasi Balibó

213. Sehari setelah deklarasi kemerdekaan Timor-Leste sepihak oleh Fretilin, keempat partai politik Timor-Leste lainnya—UDT, Apodeti, KOTA, dan TRABALHISTA—mengeluarkan ‘Proklamasi Integrasi’ mereka untuk mengimbangi langkah Fretilin. Proklamasi tersebut menuduh Fretilin menghambat solusi damai atas konflik dan hak rakyat Timor Portugis atas penentuan nasib sendiri. Kemudian proklamasi itu menyatakan bahwa “seluruh bekas koloni Timor Portugis” akan diintegrasikan ke dalam Indonesia, dan menggambarkan hal ini sebagai “pengungkapan paling tegas dari perasaan rakyat Timor Portugis”. Pemerintah dan rakyat Indonesia diminta untuk “mengambil segala langkah untuk melindungi hidup rakyat yang kini menganggap dirinya orang Indonesia namun hidup di bawah teror dan praktik fasis Fretilin dengan persetujuan Pemerintah Portugis”.²⁷⁶

214. Di bagian paling bawah deklarasi tersebut tercantum kata-kata “Dilakukan di Balibó” dan tanda tangan dari perwakilan keempat partai. Keadaan seputar pembuatan apa yang disebut Deklarasi Balibó telah menjadi sumber kontroversi selama bertahun-tahun.²⁷⁷ Komisi mendengarkan kesaksian dari para pemimpin politik Timor-Leste yang hadir pada saat penandatanganan yang mengatakan bahwa deklarasi tersebut disusun di Jakarta dan ditandatangani di sebuah hotel di Bali oleh para pemimpin partai, yang seperti dikatakan seorang penandatangan, berada “di bawah pengawasan ketat”, namun tetap berusaha berargumentasi selama berjam-jam untuk tidak menandatangani dokumen tersebut.²⁷⁸ Mereka bersaksi mengenai tekanan yang dikenakan kepada politikus Timor oleh anggota badan intelijen Bakin dalam penyusunan dan keputusan untuk memungut suara mengenai deklarasi tersebut. Deklarasi tersebut dibacakan dari pemancar radio berkekuatan tinggi di Balibó.²⁷⁹

Portugal

215. Portugal menolak baik deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin maupun ‘Deklarasi Balibó’. Komunike Dewan Nasional Dekolonisasi Portugal pada 29 November menyatakan bahwa Portugal masih menganggap dirinya “penguasa yang memerintah” Timor.²⁸⁰ Komunike tersebut juga mengutuk intervensi militer atas wilayah tersebut, dengan jelas mengacu kepada serangan militer Indonesia. Pemerintah Portugis bersikukuh bahwa Timor-Leste harus mencapai penyelesaian hasil perundingan ketiga partai politik, yang dapat memuaskan rakyat Timor-Leste dan dengan ketentuan bahwa “kepentingan sah wilayah geopolitik Indonesia” akan dipertimbangkan.²⁸¹

.....
* Tiga dokumen lainnya, yang ditandatangani oleh orang Timor-Leste yang menyatakan atau membuat petisi untuk integrasi, Deklarasi Suai dan Bobonaro serta Petisi Batugade, sudah ada sebelum ‘Deklarasi Balibó’. Komisi menerima kesaksian bahwa dalam setidaknya dua dari dokumen-dokumen ini, Deklarasi Suai dan Petisi Batugade, agen-agen Indonesia juga terlibat dalam perumusan dan pemberian tekanan terhadap penandatangan [lihat Submisi Domingos de Oliveira, hal.31 dan Wawancara CAVR dengan Claudio Vieira, Kupang, 25 Agustus 2004].

Indonesia

216. Deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin menjadi pemicu bagi Presiden Soeharto untuk mengesahkan invasi besar-besaran Indonesia atas Timor-Leste.²⁸² Setelah bertemu dengan Presiden Soeharto pada 29 November, Menteri Penerangan Indonesia Mashuri mengeluarkan pernyataan yang menyesalkan “tindakan sepihak” Fretilin dan posisi pemerintah Portugal yang “jelas-jelas merestui tindakan Fretilin.”²⁸³ Indonesia mengutuk tindakan sepihak Fretilin tetapi “sungguh-sungguh memahami pernyataan UDT, Apodeti, KOTA, dan Tralabista yang atas nama rakyat Timor Portugis, mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia.”²⁸⁴

217. Ketika Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menerima Proklamasi Integrasi pada 1 Desember, ia mengatakan bahwa “perjuangan berat” masih ada di depan dan Indonesia akan memberikan “dukungan yang terselubung atau terbuka secara menyeluruh.” Adam Malik menyimpulkan dengan mengatakan “Diplomasi sudah berakhir. Kini persoalan Timor-Leste akan diselesaikan di medan tempur.”²⁸⁵

Tanggapan internasional yang lebih luas

218. Para pelaku penting dalam komunitas internasional telah lama menyadari bahwa invasi militer Indonesia atas Timor Portugis sangat mungkin terjadi. Australia sudah lama menerima bahwa penggabungan sudah menjadi kebijakan Indonesia yang “tetap” (lihat bagian 3.6: Keterlibatan Indonesia yang semakin besar: Destabilisasi dan Diplomasi, butir 112 - 138) dan mengetahui tentang skala keterlibatan militer Indonesia di wilayah tersebut.²⁸⁶ Banyak dokumen juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat juga mengetahui tentang rencana Indonesia untuk menguasai Timor-Leste dengan cara militer.²⁸⁷ Australia menolak memberi pengakuan kepada bangsa baru ini dan memandang tindakan Fretilin sebagai “provokatif dan tidak bertanggung jawab”.²⁸⁸ Amerika Serikat menegaskan posisinya untuk tidak terlibat.²⁸⁹ Negara-negara Afrika yang baru merdeka, yakni Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambik, dan San Tomé dan Príncipe semuanya mengakui kemerdekaan Timor-Leste namun semua bangsa ini terlalu kecil untuk memiliki pengaruh dalam politik internasional. Cina dan Vietnam, pendukung Fretilin utama di Asia, memberi ucapan selamat yang hangat. Cina adalah satu-satunya anggota permanen Dewan Keamanan PBB yang mengakui deklarasi kemerdekaan tersebut.

219. Pada 6 Desember, sehari sebelum invasi, Presiden Gerald Ford dan Menteri Luar Negerinya, Henry Kissinger, berada di Jakarta. Para analis CIA memprediksikan bahwa invasi akan terjadi setelah keberangkatan Ford.²⁹⁰ Pada 6 Desember, Kissinger menyatakan bahwa penggunaan senjata buatan AS dalam operasi militer semacam itu dapat menjadi masalah, tapi kemudian menambahkan bahwa:

[I]tu tergantung bagaimana kita menafsirkan hal ini: apakah untuk membela diri atau sebagai operasi luar negeri.²⁹¹

220. Walaupun mengetahui hal ini, tidak pernah ada upaya oleh negara mana pun untuk mencegah Indonesia, dan tidak ada satu negara pun yang mendekati Fretilin, yang lalu menyadari keterkucilannya.

Invasi besar-besaran di ambang pintu

221. Setelah deklarasi kemerdekaan situasi di Timor-Leste menjadi semakin tegang. Pimpinan Fretilin menunggu Indonesia menginvasi dan setiap malam anggota Komite Sentral melakukan patroli.²⁹² Pada 2 Desember delegasi Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Dili menerima telegram dari pemerintah Australia yang memperingatkan semua warga Australia di Timor-Leste untuk meninggalkan negeri tersebut demi keselamatan masing-masing.²⁹³ Kenetralan ICRC sudah diakui oleh Fretilin, namun tidak oleh UDT, Apodeti, dan Indonesia. ICRC terpaksa mengungsi ke Pulau Ataúro pada 2 Desember, dan berencana untuk menjalankan klinik di situ untuk melayani Dili. Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan RDTL, Rogério Lobato, mengeluarkan pernyataan:

Berdasarkan informasi dari sumber-sumber intelijen Fretilin, kami menduga bahwa serangan besar-besaran atas Timor-Leste, atas khususnya ibukota Dili ... Kami menyerukan dunia untuk menghentikan agresi kriminal ini, karena akan menyebabkan pertumpahan darah yang tiada henti. Bangsa Timor-Leste akan melawan.²⁹⁴

222. Pada 4 Desember, sebuah delegasi yang terdiri atas Menteri Urusan Ekonomi dan Politik Mari Alkatiri, Menteri Urusan Hubungan Luar Negeri dan Informasi José Ramos-Horta, dan Menteri Pertahanan Nasional Rogério Lobato, meninggalkan Timor-Leste.²⁹⁵ Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste menugaskan delegasi untuk menjalankan kampanye diplomatik di luar negeri dan mencari persenjataan untuk membela republik baru ini.²⁹⁶ Pada 6 Desember, kelompok pekerja ICRC terakhir meninggalkan Dili ke Ataúro. Sore itu orang-orang mulai mengungsi ke pegunungan. Malam itu Roger East, satu-satunya reporter luar negeri yang tinggal di Timor-Leste, menulis:

Dengan semakin memburuknya situasi keamanan, orang-orang perlahan mulai mengungsi ke perbukitan. Malam ini Dili sepi dan hampir kosong, ditinggalkan oleh penghuninya. Jam malam mulai diberlakukan pada hari keempat dan serdadu bersenjata menjaga pantai dan jalan-jalan.²⁹⁷

Invasi besar-besaran

Tinjauan

223. Keinginan Indonesia untuk melaksanakan invasi besar-besaran terhadap Timor-Leste menjadi jelas pada bulan Desember. Intelijen Australia sedang memantau situasi, dan pada 2 Desember Pemerintah Australia memberitahukan warga negaranya untuk meninggalkan Timor-Leste. Sebagian besar orang asing yang masih berada di wilayah itu pergi beberapa hari kemudian. Fretilin mengirim delegasi untuk melakukan kampanye diplomatik. Pasukan invasi mencakup sebagian kecil anggota UDT dan Apodeti. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan kesan bahwa mereka hanya dibantu oleh sejumlah “sukarelawan” Indonesia. Militer bahkan sampai menghapuskan tanda pengenal dari kapal pendarat dan menggunakan berbagai senjata yang dibeli khusus untuk penyerangan itu, yang tidak dapat ditelusuri hingga ke sponsor utama militernya, yakni Amerika Serikat. Walau demikian, invasi tersebut adalah serangan skala penuh dari udara dan laut, yang melibatkan sejumlah besar pasukan. Fretilin memberi perlawanan terhadap pasukan invasi ketika para pemimpin politiknya mundur ke berbagai bukit Aileu. Pada hari invasi, terjadi sejumlah kekejaman yang dilakukan pasukan Indonesia terhadap penduduk sipil Timor, termasuk banyak pembunuhan dan pembantaian.

224. Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan segera membahas invasi tersebut dan Dewan Keamanan dengan suara bulat mengeluarkan resolusi pada 22 Desember untuk mengutuk invasi itu, menuntut penarikan segera Pasukan Indonesia dan menegaskan kembali hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. Seorang utusan PBB dikirimkan untuk menilai situasi di Timor-Leste, tetapi upayanya dihambat dan debat PBB pun dipindahkan ke Sidang Umum pada awal 1976.

Keputusan Indonesia untuk menginvasi dan melakukan perang terbuka

225. Pada 28 November 1975, Pasukan Indonesia sudah menguasai cukup banyak daerah di Timor-Leste. Pemerintah Indonesia menyelesaikan persiapan akhir politiknya pada awal Desember, dan membulatkan tekadnya untuk mengambil alih wilayah itu. Ini bukanlah berita baru bagi para penguasa Barat. Intelijen AS dan Australia telah memantau penguatan pasukan Indonesia, dan pemerintah mereka telah terlibat dalam dialog yang terus-menerus dengan Indonesia selama periode operasi militer di bawah Operasi Flamboyan, terutama melalui Harry Tjan Silalahi dan Jusuf Wanandi dari CSIS, *think-tank* yang dibentuk oleh Kepala Intelijen, Jenderal Ali Moertopo. Setelah mendapat peringatan dari Pemerintah Australia pada 2 Desember, sebagian besar warga asing yang masih tersisa segera pergi dari Dili. Warga Australia Roger East adalah satu-satunya wartawan asing yang tersisa di wilayah itu.

226. Dalam pertemuannya di Townsville dan Wonosobo dengan Presiden Soeharto, Perdana Menteri Australia Gough Whitlam telah menyatakan persetujuannya kepada Indonesia untuk menggabungkan Timor-Leste ke dalam wilayah Indonesia.²⁹⁸

Menyadari akan adanya kunjungan Presiden AS Gerald R. Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger ke Jakarta pada 5 Desember, Fretilin dengan putus asa mengirimkan surat kepada Presiden Ford:

Kami telah dituduh di Sidang Umum PBB sebagai negara agresor...
Kini kami mendengar bahwa "Timor-Leste telah melakukan tindakan agresi" melawan Indonesia dan bahwa rakyatnya menuntut intervensi penuh. Pemerintah kami yakin bahwa tuduhan-tuduhan tidak berdasar ini adalah awal dari sebuah peperangan terbuka.²⁹⁹

227. Invasi terhadap Timor-Leste yang akan segera terjadi dibahas secara singkat antara Presiden Gerald R. Ford, Presiden Soeharto, serta Menteri Luar Negeri Kissinger. Pihak Amerika Serikat mengungkapkan persetujuannya terhadap penggabungan Indonesia atas Timor-Leste yang bakal terjadi:

[Soeharto] Kami meminta pengertian Anda jika kami merasa perlu mengambil tindakan yang cepat dan drastis.

[Ford] Kami akan memahami dan tidak akan memperlakukan hal ini. Kami memahami masalah yang Anda hadapi dan maksud Anda.³⁰⁰

228. Setelah berhasil mendapatkan dukungan utama internasional, Indonesia juga ingin mengesahkan keputusannya secara domestik melalui parlemen. Pada 6 Desember, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Indonesia menyatakan bahwa:

Mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah penyelesaian terhadap masalah Timor-Timur.

Sangat menyesali tindakan Fretilin untuk mendeklarasikan kemerdekaan Timor Portugis pada 28 November 1975, yang jelas bertentangan... [proses dekolonisasi]...sesuai dengan persetujuan Roma.³⁰¹

229. Pernyataan MPR diakhiri dengan menyatakan kembali prinsip anticolonial Indonesia. Pada hari yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan ketetapan yang menyatakan bahwa:

Terdapat kehendak dari rakyat Timor Portugis untuk bergabung dengan Republik Indonesia, yang harus diakui oleh DPR.³⁰²

* Tidak ada persetujuan formal antara Portugal dan Indonesia dari pertemuan Roma pada November. Pada saat berlangsungnya pertemuan itu, pasukan Indonesia sudah menduduki beberapa bagian Timor Portugis, administrasi kolonial Portugis berada di Ataúro, dan berbagai upaya Fretilin untuk berkomunikasi dengan mereka pun tidak terjawab. Komisi mendengar sebuah submisi dari anggota CSIS Jusuf Wanandi bahwa deklarasi unilateral kemerdekaan oleh Fretilin menyebabkan terjadinya perselisihan di Indonesia "untuk mendukung operasi militer untuk melibatkan diri di Timor-Leste. Oleh karena itu, apa yang sebelumnya telah digolongkan dengan operasi intelijen dan merupakan rahasia, menjadi operasi militer gabungan dan didukung oleh semua pasukan..." Lihat submisi yang dibuat di audiensi publik nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974 - 1976, 16 Desember 2003.

Dili mempersiapkan strategi pertahanannya

230. Fretilin dapat mengandalkan 10.000 pasukan untuk mempertahankan Timor-Leste, yang terdiri atas 2.500 serdadu profesional Timor dalam tentara Portugis, dan sekitar 7.000 warga sipil terlatih.³⁰³ Pasukan itu dipersenjatai dengan senapan Mauser dan amunisi yang berlimpah dari persediaan NATO Portugis. Fretilin juga memiliki kepemimpinan militer yang kompeten, dipimpin oleh Fernando do Carmo, anggota militer Timor dalam angkatan bersenjata Portugis. Selama periode operasi rahasia Indonesia di perbatasan dari September 1975 sampai invasi Dili bulan Desember, pasukan Fretilin unggul di beberapa daerah, di mana pasukan Indonesia tidak memiliki dukungan artileri angkatan laut, dan mendapatkan pengalaman perang yang berharga.

231. Pada Oktober, Fretilin mengirim telegram kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, menunjukkan keinginannya untuk melawan intervensi bersenjata oleh Indonesia:

Kami akan melawan sampai orang yang terakhir dan tidak akan pernah meletakkan senjata selagi hak demokratik rakyat kami tidak dihormati. Indonesia sangat terlibat dalam pelatihan pasukan gerilya di Timor Indonesia yang merupakan pelanggaran prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional. Kami menyerukan Anda untuk menghentikan agresi militer Indonesia terhadap bangsa kami.³⁰⁴

Berbagai persiapan militer Indonesia: Operasi Seroja

232. Perlawanan yang dihadapi Pasukan Khusus selama serangan penyusupan mereka pada Agustus dan September mendorong dibentuknya Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja* pada Oktober 1975, dan jumlah pasukan ditambah hingga 3.200 orang.³⁰⁵ Balabantuan ini termasuk Detasemen Tempur ke-2 Kopassandha,† Batalion Infanteri ke-5‡ Marinir dari Surabaya, kapal selam Ratulangi, dua pesawat pengangkut angkatan udara, dan tiga batalion dari Brigade Infanteri ke-2 (Jawa Timur).³⁰⁶ Sementara berbagai serangan susupan di perbatasan berlanjut, yang berakibat majunya ABRI di kawasan perbatasan kota pesisir Balibó dan Atsabe, Komando Seroja merencanakan invasi besar-besaran terhadap Timor-Leste. Ini menjadi serangan dari dua sisi oleh pasukan gabungan terhadap Dili pada 7 Desember. Rencana itu menggunakan beberapa batalion Marinir dan Infanteri Angkatan Darat yang dibawa dengan kapal dari kota perbatasan Atabae di Distrik Bobonaro, yang telah diduduki oleh Brigade Infanteri ke-2 dan Tim Susi. Tujuannya adalah untuk melakukan sebuah pendaratan amfibi di Dili saat fajar, tidak lama kemudian diikuti oleh turunnya pasukan terjun payung dari Komando Pasukan Sandhi Yudha dan Kostrad ke pusat kota.³⁰⁷

* Brigadir Jenderal Chamid Soeweno, yang saat itu bertugas sebagai Komandan Pusat Intelijen Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), adalah komandan terpilih. Kol. Dading Kalbuadi tetap menjadi Asisten Intelijen.

† Komando Pasukan Sandhi Yudha.

‡ Diganti menjadi Pasmar 1.

Invasi Dili dan Baucau

Penyerangan

233. Pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan serangan besar-besaran atas Dili. Ini adalah ofensif militer besar yang melibatkan pasukan dengan dukungan penuh dari laut dan udara.³⁰⁸ Penyerangan ini dilakukan tanpa adanya formalitas pernyataan perang.³⁰⁹ Kota Dili sudah berada dalam kondisi siaga selama berhari-hari, menantikan serangan. Pada 1975, jumlah penduduk Dili kurang-lebih 28.000 penduduk. Sementara beberapa unit bersenjata Fretilin bertahan untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan invasi, penduduk sipil dan pemimpin Fretilin menyingkir menuju Aileu. Banyak yang tidak dapat melarikan diri. Pasukan invasi melakukan kekejaman terhadap masyarakat sipil dan membuat beberapa kesalahan militer besar yang mengakibatkan kematian yang signifikan di pihak mereka sendiri.

234. Pada 6 Desember sore hari, beberapa ratus Partisan Timor dan pasukan Indonesia dari Unit Marinir 1 menaiki Kapal Perang Angkatan Laut Teluk Bone di Atabae dan berlayar menuju Dili. Mereka akan melakukan persiapan pendaratan pada malam hari untuk invasi besar-besaran pada hari berikutnya.³⁰⁹ Pada pukul 02.00 7 Desember, lima kapal perang Indonesia tiba lagi di Dili.³¹⁰ Melihat kehadiran mereka, Fretilin mematikan listrik kota pada pukul 03.00, menyelimuti kota dengan kegelapan. Kapal-kapal komando angkatan laut Indonesia pun mulai menembaki Dili, namun ini tidak terjadi sesuai rencana. Wartawan Indonesia Subroto menyertai pasukan invasi dan melaporkan:

Karena merasa faktor pendudukan telah hilang, maka Pangkogasgab Brigjen. TNI Soewono memerintahkan KRI Ratulangi, KRI Barakuda, KRI Martadinata, dan KRI Jayawijaya membuka tembakan ke arah pantai. Gempuran ini terlampau hebat sehingga unsur pendudukannya semakin tidak ada dan malah membuat satuan Pasmar 1 yang telah mendarat tidak dapat bekerja secara maksimal akibat tembakan meriam itu.³¹¹

235. Kira-kira pukul setengah lima pagi, 400 marinir[†] bersama dengan tank-tank amfibi ringan dan kendaraan pengangkut personel bersenjata mendarat di Kampung Alor yang terletak di barat Dili.³¹² Perlawanan Fretilin/Falintil tidak banyak, dan pada pukul tujuh Marinir Indonesia telah berhasil menguasai daerah itu. Setelah itu Angkatan Laut Indonesia membombardir bagian timur dan barat kota Dili, yang mereka sangka adalah tempat artileri Fretilin, untuk persiapan kedatangan pasukan terjun payung.³¹³

.....
* Jumlah pasukan yang menyerbu tidak diketahui dengan pasti. Namun, selain tambahan beberapa ribu yang mendarat pada 7 dan 10 Desember, 10-20.000 diperkirakan sudah mendarat selama beberapa minggu berikutnya, termasuk sejumlah besar lagi pada hari Natal. Lihat Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War against East Timor*, Zed Books, London, 1984, hal. 15, 23; Dunn 2003, hal. 244.

† Dari Batalion Tim Pendarat Ke-5 (Yonif 5, Brigif 1, Pasukan Marinir, yang disebut sebagai Pasmar 1).

236. Sebelumnya, sebelum pukul enam pagi, sembilan pesawat Hercules C-130B terbang di atas Dili dan menurunkan kontingen pertama pasukan terjun payung Kopassandha/Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kelompok 1) dan Kostrad (Yonif 501).³¹⁴ Intelijen yang kurang baik menyebabkan pasukan ini diturunkan langsung di kota, tempat pendaratan yang sangat berbahaya.³¹⁵ Sebagian besar pasukan ini mendarat di timurlaut Dili. Beberapa pasukan terjun payung ditembaki oleh pasukan Fretilin/Falintil ketika masih di udara; yang lainnya terluka atau mati saat mereka mendarat di antara sejumlah gedung dan kabel listrik. Satu pesawat menurunkan sejumlah pasukan terjun payung di laut, sehingga mereka tenggelam, dan yang lainnya di belakang garis Fretilin.³¹⁶ Penerjunan kedua dilakukan menjelang pukul delapan pagi dan mengakibatkan beberapa unit ABRI saling bertempur dalam kebingungan. Karena penerjunan pagi hari tidak berlangsung dengan baik, penurunan pada sore harinya dibatalkan oleh Komando Pasukan Tugas Gabungan.³¹⁷

237. Pasukan Fretilin/Falintil yang mempertahankan kota menikmati sukses awal. Ketika dua pesawat Dakota C 47 yang membawa 38 tentara Pasukan Khusus mencoba untuk mendarat dan menguasai pelabuhan udara Comoro di barat Dili, Fretilin berhasil menghalau salah satu pesawat itu.³¹⁸ Meskipun demikian, tidak lama kemudian dengan kekuatan senjata yang lebih besar ABRI mulai unggul. Seperti yang dikatakan serdadu Fretilin/Falintil Carlos Maria Soares:

...Kami berada di Pos Fretilin di Bidau Santana. Kami mulai melakukan perlawanan terhadap TNI [ABRI] di bawah komandan Amandio. Pada saat itu kami berjumlah 21 orang...Perlawanan kami tidak bertahan lama karena kami tidak memiliki kekuatan yang seimbang dan kekurangan amunisi.³¹⁹

238. Pada tengah hari pasukan Indonesia berhasil menduduki *Palácio das Repartifões* (sekarang) yang berada di jantung kota Dili dan menempatkan tim-timnya di sepanjang jalan utama ke luar dari pusat kota. Pasukan Fretilin/Falintil tetap menguasai Taibessi dan Lahane di kaki bukit di selatan Dili, begitu juga beberapa bukit di selatan Fatuhada dan di dekat pelabuhan udara Comoro.

Kontrol informasi: upaya menyembunyikan keterlibatan ABRI

239. Untuk mempertahankan dongeng bahwa tidak satu pun personil militernya terlibat, ABRI menghapus tanda pengenal pada pesawatnya.³²⁰ Pasukan ABRI menggunakan AK-47 dan senjata ringan lainnya yang didapatkan oleh Jenderal Benny Moerdani khusus untuk menginvasi Timor-Leste. Tujuannya adalah untuk menyangkal keterlibatan ABRI dan menghindarkan pelibatan penyalur senjata utama ABRI, khususnya Amerika Serikat.³²¹ Sebagian besar dari persenjataan berat—pesawat, kapal, dan landasan pesawat—juga pelatihan kebanyakan tentara elite seperti brigade lintas udara – telah dipasok oleh Amerika Serikat.³²²

240. Satu-satunya wartawan asing yang tetap berada di Timor-Leste, warga Australia Roger East, dibawa dari Hotel Turismo pada pagi hari terjadinya pendaratan dan

dibunuh di pantai oleh pasukan Indonesia.³²³ Jumlah wartawan asing yang mati karena dibunuh oleh militer Indonesia menjadi enam orang dalam waktu kurang dari dua bulan, dan ini memastikan bahwa cerita mengenai invasi Indonesia dan berbagai operasi setelahnya tidak diliput secara dekat oleh media internasional.

241. Militer Indonesia berupaya untuk mempertahankan cerita bohong bahwa invasi terhadap Dili telah dilakukan oleh Partisan Timor dari empat partai politik yang telah menandatangani Deklarasi Balibó. Sehari setelah invasi Dili, sebuah surat kabar resmi Indonesia menyebutkan “jatuhnya Dili pada 7 Desember ke tangan pasukan gabungan Apodeti, UDT, Kota, dan Tralabista.”³²⁴ Pernyataan ini hanya menyebut secara selintas pada halaman tiga tentang “sukarelawan” Indonesia yang terlibat dalam operasi itu. Enam hari kemudian Menteri Penerangan Indonesia mengatakan bahwa:

Para sukarelawan yang atas permintaan Apodeti, UDT, Kota, dan Tralabista membantu saudara-saudaranya di Timor Portugis tidak mungkin lagi ditahan oleh Pemerintah [Indonesia].³²⁵

242. Para wartawan Indonesia menyebarkan dan berkali-kali memberitakan kebohongan ini, yang memperkuat mitos bahwa Indonesia tidak menginvasi melainkan partai pendukung integrasi Timor yang kembali mengambil kekuasaan di wilayahnya dengan bantuan dari sejumlah kecil “sukarelawan” Indonesia.³²⁶ Sejarawan Indonesia Asvi Warman Adam, Profesor Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan kepada Komisi bahwa mitos ini punya dampak jangka panjang di Indonesia.³²⁷ Dalam menilai beberapa titik sejarah penting dia percaya bahwa perlu ada pertimbangan kembali di Indonesia berkaitan dengan periode ini. Asvi Warman Adam mengatakan kepada Komisi bahwa:

Stilah ‘sukarelawan’ jelas tidak benar sebab harus diakui bahwa mereka adalah tentara Indonesia.

243. Mengenai skala penyerangan terhadap Dili, Asvi Warman Adam mengatakan kepada Komisi bahwa serangan ini dapat “disejajarkan dengan serangan untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta [pada 1958] yang merupakan operasi militer terbesar dalam sejarah perang Indonesia”.

Kekerasan besar-besaran terhadap penduduk sipil

244. Selain pembunuhan penduduk sipil yang sewenang-wenang, sejumlah pembunuhan besar-besaran terjadi selama beberapa hari pertama invasi. Komisi diberitahukan bahwa anggota komunitas Cina di Dili menjadi sasaran serdadu Indonesia, ketika sekelompok penduduk sipil dibunuh di daerah pusat kota di Colmera dalam dua hari pertama.³²⁸ Pada 8 Desember terjadi pembunuhan terhadap beberapa kelompok penduduk sipil di pelabuhan Dili, termasuk Isabel Lobato, istri dari pemimpin Fretilin Nicolau Lobato, yang ditembak di bagian punggung di pagi hari, anggota Fretilin Rosa Muki Bonaparte, dan wartawan Australia Roger

East di sore hari.³²⁹ Bukti menunjukkan bahwa para anggota Fretilin ditarik keluar dari sekumpulan penduduk sipil yang kebingungan dan telah berkumpul di dekat pelabuhan. Orang-orang ini kemudian dibawa ke pelabuhan dan dibunuh.³³⁰ Komisi menerima bukti mengenai sebuah “daftar incaran” ABRI yang berisi para individu yang menjadi sasaran pembunuhan, yang disusun selama bulan-bulan berlangsungnya operasi intelijen rahasia menjelang invasi besar-besaran.³³¹

245. Pada 8 Desember, Jenderal Benny Moerdani berkeliling di Dili didampingi oleh Kolonel Dading Kalbuadi, dan mengunjungi pelabuhan:

Siang itu Kolonel AL R. Kasenda, Kepala Staf Komando Tugas Gabungan, turun dari KRI Ratulangi untuk menginspeksi kota Dili. Inspeksi tersebut dilakukan dengan mengendarai kendaraan amfibi BTR-50 APC (pengangkut personil). Di pelabuhan Dili, Kapten AL R. Kasenda bertemu dengan Mayor Jenderal Benny Moerdani, lalu ia berjalan bersamanya menuju kantor Gubernur. Pada saat itu di jalanan masih tergeletak mayat-mayat Fretilin yang belum dikuburkan.³³²

246. Berbagai kelompok penduduk sipil lainnya dibunuh ketika pasukan Indonesia bergerak menuju markas Falintil di kaki bukit di selatan Dili. Komisi mendengar sejumlah kesaksian mengenai pembantaian 21 penduduk sipil di Gedung Assistência, dekat sebuah basis Fretilin di Gedung Matadouro:

*...mereka [ABRI] memisahkan yang laki-laki dari yang perempuan. Mereka membawa para lelaki itu ke sisi gedung yang tertutupi rumput yang tinggi... Segera setelah itu, kami mendengar suara tembakan dan ledakan sebuah granat. Tembakan berlangsung sangat lama... para lelaki yang telah dibawa ke sisi gedung itu semuanya telah dibunuh.*³³³

247. Pembunuhan penduduk sipil oleh pasukan Indonesia ini tampaknya merupakan sebuah pola yang terjadi berulang kali pada hari invasi.³³⁴ Sebuah pernyataan kepada Komisi mengenai satu pembantaian lain di daerah Kaikoli di Dili tengah, mengatakan bahwa:

*Pada 7 Desember Indonesia melakukan invasi dengan pasukan terjun payung dini hari, mendarat di Dili. Pada saat itu komandan [Falintil] Sersan Constancio Soares ditembak mati tepat di depan toko Sang Thai Ho di Colmera. Tengah hari TNI menyerang markas besar polisi militer di Caicoli dan menangkap sekitar 50 orang. TNI memerintahkan mereka berbaris dan kemudian menembak mati mereka.*³³⁵

Para pemimpin Fretilin menyingkir ke pedalaman

248. Komisi mendengarkan banyak kesaksian dan pernyataan mengenai pengungsian ke pedalaman ketika invasi terjadi.³³⁶ Rencana Fretilin adalah untuk mengundurkan diri ke selatan, dengan memberikan perlawanan yang cukup untuk menghalang-halangi majunya pasukan Indonesia. Sejumlah besar penduduk sipil Dili lari dengan mereka menuju Aileu.³³⁷

249. Walaupun telah ada permohonan dari ICRC menjelang invasi besar-besaran, Fretilin tetap membawa para tahanan UDT dan Apodeti ketika mereka meninggalkan Dili.

Pasukan invasi menduduki Baucau

250. Pada 9 Desember, empat kapal perang Indonesia membawa para marinir Indonesia dan 1.500 partisan Timor, dan dua kapal perang fregat Indonesia buatan Soviet meninggalkan perairan Dili menuju Baucau. Kira-kira pukul enam pagi 10 Desember, dengan dukungan artileri Angkatan Laut, satu tim Marinir yang dipandu oleh Manuel Carrascalão di bawah komando Kolonel Dading Kalbuadi mendarat di pantai dekat Laga di Distrik Baucau. Komisi mendengar kesaksian bahwa serangan di Baucau hampir tidak menemui perlawanan bersenjata sehingga pasukan Indonesia dapat menguasai kota itu dengan cepat.³³⁸

Harga invasi besar-besaran

251. Berbagai kekejaman yang dilakukan terhadap penduduk sipil di Dili pada hari-hari pertama invasi terdiri atas pelanggaran berat hak-hak asasi manusia. Hampir tidak ada sanksi disipliner bagi pasukan Indonesia yang bertanggung jawab atas tindakan seperti itu. Tragisnya, ini menjadi pola impunitas penuh atas kekerasan terhadap penduduk sipil yang menjadi ciri dalam konflik di tahun-tahun mendatang. Pada hari kesembilan invasi, Fretilin mengirimkan lagi satu telegram kepada Dewan Keamanan PBB. Menteri Informasi Fretilin Alarico Fernandes melaporkan penjarahan yang merajalela di Dili, dan kehadiran 19 kapal di pelabuhan, yang terlibat dalam penjarahan tersebut.³³⁹

252. Harga yang harus dibayar dalam hal kematian bagi pasukan Indonesia juga tinggi. Invasi pertama ABRI berhasil mencapai tujuan militer yaitu mengambilalih Dili dan Baucau, tetapi perencanaan yang buruk dan perubahan pada saat-saat terakhir mengakibatkan kekacauan dalam pendaratan amfibi dan tingginya angka kematian pasukan terjun payung elite Kostrad dan Kopassandha. Jenderal Benny Moerdani, yang memainkan peran utama dalam merencanakan invasi itu, memberikan analisis berikut ini mengenai pasukan invasi Indonesia:

Pasukan (kami) tidak menerapkan disiplin, mereka saling menembak satu sama lain. Ini memalukan... Dari perspektif militer, kami tidak merasa bangga atas operasi tersebut.³⁴⁰

Tanggapan PBB terhadap invasi besar-besaran

253. Komisi mendengarkan kesaksian mengenai situasi PBB di New York pada saat itu dari David Scott, seorang pekerja keadilan sosial senior Australia, yang telah dikirim oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil ke New York untuk mendukung upaya José Ramos-Horta, tidak lama setelah terjadinya invasi:

Sekretaris Komite Keempat, yang tengah membahas laporan invasi oleh Indonesia, mengatakan kepada saya bahwa sangat sedikit orang di New York dan di PBB yang mengetahui apapun tentang Timor. Delegasi Indonesia mengatakan bahwa “kita pergi ke Timor itu seperti memadamkan api di dapur di rumah sebelah, dan setelah itu kita akan mundur.”

Keesokan harinya Ramos-Horta datang dengan Araújo, dan sebuah momen penting adalah diterimanya Ramos-Horta sebagai perwakilan rakyat Timor... dalam dua minggu berikutnya, Ramos-Horta... berkampanye dengan gigih untuk mengangkat kasus pengakuan dan mempertahankan permasalahan Timor di agenda PBB dan mendukung resolusi-resolusinya, yang menyerukan Indonesia untuk menarik diri, dan menegaskan hak Timor atas penentuan nasib sendiri.³⁴¹

254. Pada 12 Desember Sidang Umum mengesahkan Resolusi 3485, yang mengutuk invasi itu dan menyerukan penarikan pasukan Indonesia dari Timor Portugis. Dewan Keamanan melangsungkan pertemuan tiga kali pada Desember untuk mendiskusikan situasi di Timor-Leste, dan pada 22 Desember dengan suara bulat mengeluarkan Resolusi 384 yang menuntut Indonesia untuk menarik pasukannya dan menegaskan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri.

255. Resolusi Dewan Keamanan menginstruksikan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengirim seorang utusan khusus ke Timor-Leste. Perwakilan itu, Winspeare Guicciardi, mengunjungi berbagai wilayah di Timor-Leste yang dikuasai oleh Indonesia pada akhir Januari 1976. Namun upayanya untuk bertemu dengan pimpinan Fretilin dihalang-halangi. Komisi mendengar kesaksian mengenai berbagai upaya untuk menyiapkan beberapa tempat pendaratan yang aman di pantai selatan, melalui siaran radio Fretilin ke sebuah set radio di Darwin. Meskipun demikian, berbagai tempat yang memungkinkan untuk dijadikan pendaratan itu dibom oleh militer Indonesia dan Pemerintah Australia menutup radio tersebut sehingga semakin mengacaukan upaya untuk berkomunikasi.³⁴² Indonesia juga mengancam akan menenggelamkan sebuah *corvette* Portugis yang akan digunakan untuk mendaratkan Guicciardi di pantai selatan Timor-Leste untuk pertemuan-pertemuan ini.³⁴³

256. Akibatnya adalah bahwa PBB tidak mendapatkan informasi yang baik mengenai situasi di Timor-Leste pada saat itu, dan PBB tidak berhasil mendengar pandangan kepemimpinan Fretilin di dalam wilayah itu atau melihat sendiri kondisi di sejumlah daerah yang dikuasai Fretilin. Setelah tanggapan awal ini, PBB tidak pernah mengambil

langkah yang berarti untuk segera mengunjungi Timor-Leste. Debat kembali pada Sidang Umum, yang walaupun terus mengutuk invasi itu dan menegaskan kembali hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, tidak pernah melakukan tekanan yang berarti untuk memaksa Indonesia menghentikan aksinya.³⁴⁴

Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan dan upaya Indonesia untuk meresmikan integrasi

Tinjauan

257. Indonesia segera membentuk Pemerintahan Sementara pada 17 Desember 1975, yang sebagian besar terdiri atas para anggota Partai Politik Apodeti dan UDT yang ikut dalam invasi besar-besaran.³⁴⁵ José Ramos-Horta diterima di PBB sebagai juru bicara bagi rakyat Timor, dan kegiatan diplomatik saat itu sungguh menegangkan.

258. Kepemimpinan Fretilin telah menarik diri ke wilayah pedalaman, dengan membawa para tahanan UDT dan Apodeti yang sebelumnya ditahan di penjara mereka di Taibessi Dili. Ketika pasukan Indonesia bergerak mendekati ke markas Fretilin di Aileu, para anggota Fretilin melakukan pembantaian terhadap sejumlah besar tahanan ini. Ketika mundur dari pasukan Indonesia yang semakin mendekati, pembantaian tahanan terjadi lagi di Maubisse dan Same pada akhir Desember dan Januari 1976.

259. Sejumlah besar penduduk sipil Timor telah mengosongkan wilayah permukiman di kota dan desa, dan menetap di berbagai daerah yang dikuasai Fretilin. Pada Mei 1976, Fretilin mengadakan konferensi nasional untuk membahas strateginya. Fretilin merumuskan suatu strategi perlawanan nasional yang didasarkan pada penduduk sipil yang tinggal di pegunungan bersama para pejuang di sejumlah kawasan bebas. Warga sipil akan memberikan dukungan logistik kepada para pejuang Fretilin. Berbagai organisasi perempuan dan pemuda melakukan sejumlah kegiatan pendidikan dan kegiatan sosial lainnya, serta membentuk jaringan kesehatan. Secara umum, masyarakat yang tinggal di beberapa daerah ini berada di luar jangkauan militer Indonesia selama sebagian besar 1976.

260. Pada 31 Mei 1976, Indonesia mencoba untuk mengesahkan pendudukannya atas Timor-Leste. Dalam sebuah upacara singkat di Dili, yang disebut sebagai 'Tindakan Integrasi', Indonesia membentuk sebuah Majelis Rakyat yang beranggotakan sekitar 30 orang dari beberapa distrik. Majelis itu membuat petisi kepada Presiden Soeharto, meminta integrasi Timor-Leste ke Indonesia. Anggota-anggota Majelis diterbangkan ke Jakarta untuk menyerahkan petisi itu kepada Presiden Soeharto, dan pada 17 Juli Soeharto menandatangani keputusan yang menyatakan bahwa Timor-Leste adalah bagian dari Indonesia. PBB menentang upaya ini melalui Resolusi 31/53 pada 1 Desember 1976, dan menyerukan diadakannya tindakan penentuan nasib sendiri yang dapat diterima secara internasional di wilayah itu.

ABRI melakukan konsolidasi; Indonesia mendirikan ‘pemerintahan sementara’

261. Menanggapi invasi Indonesia terhadap Timor Portugis pada 7 Desember, Sidang Umum PBB mengesahkan Resolusi 3485 pada 12 Desember. Resolusi ini menyerukan penarikan pasukan Indonesia, tetapi diabaikan oleh Indonesia. Pada 17 Desember, Indonesia mendirikan Pemerintah Sementara Timor-Timur (PSTT), dengan Arnaldo dos Reis Araújo, Ketua Apodeti, sebagai Ketua, dan Francisco Lopes da Cruz, Ketua UDT, sebagai Wakil.³⁴⁶ Dua puluh empat pria ditunjuk memegang berbagai jabatan dalam pemerintahan sementara ini dan dalam Dewan Pertimbangan. Enam belas orang di antaranya dari UDT dan Apodeti.³⁴⁷

262. Pada 18 Desember, Pemerintahan Sementara itu mengirim telegram kepada Presiden Soeharto untuk meminta bantuan militer:

Pemerintahan Sementara Timor Bagian Timur [*sic*] memohon kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan bantuan militer, sosial, dan ekonomi supaya kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Timor Bagian Timur [*sic*] dapat dipulihkan bebas dari gangguan dan ancaman sisa-sisa teroris yang ditinggalkan oleh Pemerintah Portugis.³⁴⁸

263. PSTT ini merupakan pemerintahan hanya dalam nama. Ia dibentuk untuk mempercepat proses integrasi Timor-Leste dengan Indonesia. Mario Carrascalão membenarkan ketidakberdayaan pemerintahan ini dalam pernyataannya kepada Komisi bahwa

*saya tidak dapat menyatakan bahwa PSTT benar-benar sebuah pemerintahan.*³⁴⁹

264. Indonesia tengah menghadapi perang diplomatik di PBB, di mana Indonesia mencoba untuk meredam kutukan internasional terhadap invasi Indonesia. Pada 22 Desember 1975, Arnaldo dos Reis Araújo mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB yang menolak kunjungan tim pengamat ke wilayah itu karena alasan keamanan.³⁵⁰ Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan 22 Desember, Indonesia mendaratkan lagi sekitar 10.000 pasukan sekitar Natal.³⁵¹ Sementara komunitas internasional melakukan inisiatif perdamaian yang terbatas, berbagai satuan tempur ABRI bergerak maju sepanjang jalan-jalan utama, setelah menguasai Dili dan Baucau. Yang lainnya mendarat di titik-titik strategis sepanjang pantai selatan. Ini proses yang lambat. Satuan-satuan ABRI bergerak dengan waspada.³⁵² Pada awal 1976, pergerakan utama yang pertama adalah ke selatan Dili untuk mengejar para tentara Fretilin yang telah mundur ke basis mereka di pedalaman.

Fretilin mundur, pembantaian tahanan

265. Fretilin menahan sejumlah besar tahanan UDT dan Apodeti di basisnya yang terletak di Aileu.³⁵³ Terdesak oleh majunya pasukan Indonesia, Fretilin bersiap mundur lebih jauh ke daerah pedalaman. Komite Sentral Fretilin terpecah. Pada akhir Desember, sebagian berada di Aileu, dan sebagian lagi di Maubisse.³⁵⁴ Dalam situasi seperti inilah Fretilin melakukan beberapa eksekusi massal terhadap para tahanan di daerah Aileu. Pembantaian yang pertama terjadi pada 26 Desember 1975 di Aissirimou di Aileu. Komisi diberitahukan bahwa para anggota Fretilin membunuh sekitar 22 orang. Di antara mereka terdapat mantan kepala polisi Portugis Mayor Gouveia yang berpihak dengan UDT selama perang.³⁵⁵ Pembunuhan selanjutnya terjadi di Saboria dan Aituri.³⁵⁶ Mantan Presiden Fretilin Xavier do Amaral menyampaikan analisisnya tentang bagaimana pembantaian ini terjadi:

Kami di tengah peperangan... kami lari dari musuh kami, kami berlari, kami bawa orang-orang yang kami tahan, musuh-musuh kami yang kami tahan, bersama dengan kami...

Lalu kami harus memutuskan hal ini. Apakah kami tinggalkan mereka hidup-hidup di sini? Apakah kami berlari sendiri dan meninggalkan mereka? Atau kami bunuh mereka lalu lari?...

Karenanya, beberapa dari mereka [anggota Fretilin] memutuskan untuk membunuh mereka, sehingga musuh tidak dapat membahayakan kami. Mungkin opini ini umum dimiliki, lebih kurang secara umum, oleh para pemimpin di semua tingkat.³⁵⁷

266. Pasukan Indonesia merebut Aileu pada 31 Desember 1975.³⁵⁸ Fretilin mundur lebih jauh lagi ke pedalaman, pertama ke Maubisse dan kemudian ke pantai selatan. Pembantaian tahanan terjadi lagi ketika Fretilin bergerak mundur. Komisi mendengarkan kesaksian mengenai pembantaian Fretilin terhadap lima tahanan di Maubisse pada akhir Desember, terhadap 31 tahanan di sekolah dasar di Same di daerah pantai selatan pada 29 Januari 1976,³⁵⁹ dan 8 tahanan di Hat Nipah, dekat Holarua, daerah pantai selatan pada akhir Januari atau awal Februari.³⁶⁰ Selain mendengar tentang pembantaian yang terjadi di wilayah tengah, Komisi juga menerima kesaksian mengenai pembantaian Fretilin terhadap 37 orang di Desa Kooleu di Distrik Lautém, pada awal Januari 1976.³⁶¹

Pergerakan ABRI, awal 1976

267. Pasukan dari Komando Tempur ke-2 Kostrad (Kopur II) bergerak melalui Maubisse, dan pada akhir Januari mereka bertempur untuk menguasai Celah Fleixa yang strategis. Pada 23 Februari, pasukan ini tiba di Ainaro di mana mereka bergabung

* Anggota UDT Antonio Serpa memberi kesaksian kepada Komisi bahwa dia ditahan oleh Fretilin di sebuah gudang kopi yang besar di Aileu bersama, dia mengira-ngira, 3000 tahanan. Lihat kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.

dengan tentara yang telah mendarat di Betano di daerah pantai selatan, dan dapat menguasai sementara rute tengah dari utara ke selatan. Front utama kedua terjadi di wilayah barat dekat perbatasan dengan Indonesia. Pasukan Brigade Infanteri ke-18 (Jawa Timur) bergerak melalui Bobonaro pada akhir Januari, kemudian melalui Atsabe dan Letefoho, sampai di Ermera pada 27 Maret 1976. Sementara pada 5 Februari, satu pasukan terjun payung lain turun di Suai di barat pantai selatan, dan bergerak ke timur menuju Zumalai. Militer Indonesia tidak bergerak di sepanjang pesisir utara di barat Dili hingga pertengahan tahun. Pada Juni, ABRI menyerang Liquica dan Maubara, sebelum melanjutkan ke daerah Ermera dalam serangkaian operasi singkat yang dimulai pada Juli.³⁶²

268. Operasi di timur menyebar dari Baucau. Empat ribu tentara baru diterbangkan ke Baucau pada akhir Desember 1975, di mana mereka kemudian bergabung dengan berbagai unit yang sudah beroperasi di bawah Komando Lintas Udara Kostrad (Linud Kopur Kostrad).³⁶³ Pasukan ini melancarkan operasi penyerangan sepanjang tiga jalur utama. Dari Baucau, beberapa batalion bergerak ke barat di sepanjang jalan pantai dan menguasai Manatuto pada 31 Desember. Dari Manatuto, pasukan ini kemudian bergerak ke selatan menuju Soibada. Ofensif kedua bergerak ke arah selatan dari Baucau menuju Viqueque, di mana mereka bergabung dengan pasukan marinir yang telah mendarat di Uatolari di daerah pantai selatan. Pasukan ketiga menyerang pasukan Fretilin di selatan Laga, di kaki bukit Gunung Matebian. Sasaran terakhir adalah Lautém di timur, dengan serangan pasukan terjun payung di Lospalos pada 2 Februari 1976 yang mendapat dukungan dari bala bantuan infanteri.³⁶⁴ Setelah menguasai sebagian besar kota utama Timor-Leste, pada Agustus 1976 ABRI mendirikan Komando Pertahanan dan Keamanan Regional Timor-Leste (Kodahankam), membagi wilayah itu menjadi empat sektor operasional — Barat, Tengah dan Timur, juga Dili dan Oecussi.[†]

Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan

269. Sejumlah besar[‡] masyarakat sipil telah lari ke daerah pedalaman, untuk sementara aman dari militer Indonesia. Banyak kota hampir dikosongkan oleh penduduknya ketika mereka melarikan diri dari invasi.³⁶⁵ Pemindahan adalah pengalaman yang terjadi di mana-mana, dan banyak masyarakat sipil tidak mendapatkan tempat berlindung, makanan, dan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai.[§]

* Operasi Shinta melawan Fatubesi, Operasi Tulada 1 melawan Hatolia, Operasi Tulada 2 melawan Railaco, dan Operasi Tulada 3 melawan Leorema.

† Sektor A (Dili dan Oecussi), Sektor B (Barat—Liquica, Bobonaro, Ermera, dan Covala; kurang lebih 10 Batalion), Sektor C (Tengah—Aileu, Ainaro, Manufahi, dan Manatuto; kurang lebih delapan batalion), dan Sektor D (Timur—Baucau, Viqueque, dan Lautém; kurang lebih dua belas batalion).

‡ Kemungkinan sebanyak 300.000 orang; lihat Bab 7:3 Pemindahan paksa dan kelaparan.

§ Lihat sebagai contoh, kesaksian Manuel Carceres da Costa mengenai kota Lacló di Distrik Manatuto, dan Francisco Soares Pinto mengenai kota Iliomar di Distrik Lautém, keduanya di CAVR audiensi publik nasional mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28 - 29 Desember 2003.

270. Kekerasan militer Indonesia terhadap penduduk sipil mengejutkan beberapa pemimpin politik Timor yang telah membantu dalam invasi. Mengemukakan keburukan situasi itu dan kelemahan posisinya sendiri, ketua PSTT, Arnaldo dos Reis Araújo, menulis surat secara rahasia kepada Presiden Soeharto mengenai kekhawatirannya, pada Juni 1976:

Kami mengakui bahwa perampokan terhadap bisnis pribadi, kantor pemerintahan, dan badan keuangan negara dapat terjadi karena emosi saat perang, tetapi sulit dimengerti mengapa hal ini berlanjut enam bulan kemudian, membiarkan semua orang dalam keadaan tidak aman yang kejam... Pagi dan malam hari, di rumah dan kantor saya, para janda, yatim piatu, anak-anak, dan kaum cacat meminta susu dan pakaian. Saya tak dapat berbuat apa-apa kecuali menangis untuk mereka, karena Pemerintahan Sementara tidak memiliki apa-apa...³⁶⁶

271. Di Dili, militer Indonesia memulai kegiatan yang kelak menjadi pola penahanan dan penyiksaan pada periode ini, karena mereka berusaha untuk menguasai masyarakat sipil yang mereka curigai menjadi penghubung dengan mereka yang berada di gunung.³⁶⁷ Pada pertengahan 1976, para pengungsi Timor pertama dari sejumlah kamp di Timor Barat berhasil pergi ke Portugal. Mereka memberikan beberapa pernyataan saksi mata mengenai skala kekerasan pada saat invasi.

Fretilin kembali menyusun kekuatan

272. Dari 15 Mei sampai 2 Juni 1976, Fretilin mengadakan konferensi nasional di Soibada di daerah pedalaman timur untuk menentukan strateginya. Menyadari bahwa tidak mungkin untuk terus mengimbangi ABRI, Fretilin membuat keputusan untuk memobilisasi resistansi nasional. Strateginya mencakup resistansi semi-gerilya oleh Falintil. Hal ini akan didukung secara logistik oleh penduduk sipil, yang akan ikut dengan Fretilin di gunung dan hutan.³⁶⁸ Fretilin mengambil keputusan ini tidak dengan suara bulat. Semuanya menyetujui perlunya melakukan perang resistansi, tetapi tidak semua mendukung usul untuk melakukan revolusi sosial dengan masyarakat sipil. Francisco Xavier do Amaral menyatakan kekhawatirannya mengenai kebijakan ini, sementara yang lainnya, seperti para anggota sayap militer Fretilin, mengambil sikap netral.³⁶⁹

273. Untuk melaksanakan strategi baru ini, Fretilin membentuk struktur resistansi di sejumlah 'zona bebas' (*zonas libertadas*). Dalam berbagai zona ini terdapat basis resistansi (*bases de apoio*), di mana penduduk sipil dikelilingi oleh sebuah lingkaran pertahanan yang terdiri atas pasukan Falintil, dengan dibantu oleh kompi milisi Fretilin (Miplin) dan beberapa unit pertahanan sipil (*arma branca* atau *força popular*).³⁷⁰ Di belakang garis itu, penduduk sipil, terutama perempuan, memberi dukungan logistik bagi para tentara. Fretilin menjalankan pendidikan politik kepada penduduk sipil yang berada di sejumlah basis ini untuk membangun komitmen politik yang luas bagi pembebasan nasional (lihat Bab 5: Resistansi: struktur dan strategi).

274. Selain menjalankan sejumlah sekolah dan menanam tanaman pangan, juga ada berbagai upaya untuk memproduksi obat-obatan, walaupun dalam sebagian besar kasus orang-orang harus bergantung pada obat-obatan tradisional yang berbahan dasar tanaman.³⁷¹ Manuel Carceres da Costa menceritakan kepada Komisi mengenai kehidupan di berbagai daerah kekuasaan Fretilin di Lacro, Distrik Manatuto pada 1976:

Di hutan kami membentuk dua organisasi: Organização Popular da Mulher Timorese [OPMT – Organisasi Rakyat Perempuan Timor] sebuah organisasi perempuan yang berafiliasi dengan Fretilin, dan Organização Popular Juventude de Timor [OPJT – Organisasi Rakyat Pemuda Timor] yaitu sebuah organisasi pemuda. Organisasi-organisasi ini membantu kami mengoordinasi kegiatan di antara masyarakat. Misalnya kami bekerjasama untuk berkebun dan bercocok tanam, dan kami menanam jagung di sekitar kota kecil Lacro. Tentara Indonesia belum mencapai Lacro.³⁷²

275. Fretilin juga menjalankan penjara-penjara (Renal), di mana berbagai pelanggaran hak asasi manusia biasa terjadi.³⁷³

Indonesia meresmikan integrasi

276. Tidak lama setelah pertemuan Fretilin di Soibada, Indonesia merancang apa yang disebut sebagai sebuah Undang-Undang Integrasi. Pemerintahan Sementara mengumpulkan orang-orang dalam suatu badan yang disebut Majelis Rakyat selama Mei 1976, diketuai oleh Guilherme Gonçalves. Majelis ini konon merupakan sekumpulan orang terpilih yang mewakili orang Timor. Para peserta dipilih oleh para pegawai pemerintah yang ditunjuk oleh Indonesia. Clementino Amaral berpartisipasi dalam majelis tersebut mewakili Baucau, dan mengatakan kepada Komisi:

Proses apa ini? Mereka [pemerintah Indonesia] ingin dua orang dari tiap distrik mewakili distrik masing-masing, untuk membuat petisi yang meminta Indonesia mengizinkan kami masuk Indonesia. Di Baucau, bagaimana kejadiannya? Menyelenggarakan pemilihan umum? [Tidak.] Para pejabat yang dekat dengan mereka memilih dua orang tersebut.³⁷⁴

277. Para anggota Majelis menyusun petisi kepada Presiden Soeharto yang meminta Indonesia untuk mengabulkan integrasi. Mario Carrascalão mengemukakan bahwa ini merupakan satu-satunya fungsi yang dilakukan Majelis Rakyat:

Majelis Rakyat...yang bertemu sekali pada bulan Mei 1976, di sini, hanya membahas satu poin “perjanjiannya”, yakni, integrasi tanpa referendum...[satu-satunya] tujuan adalah membicarakan ‘petisi integrasi’ yang akan dikirimkan kepada Soeharto.³⁷⁵

278. Petisi ini ditandatangani oleh Arnaldo dos Reis Araújo sebagai ketua PSTT, dan Guilherme Gonçalves selaku kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), walaupun badan ini belum dibentuk.³⁷⁶ Mengklaim dirinya mewakili rakyat Timor, dan menyebut Deklarasi Balibó sebagai dasar bagi klaim tersebut, isi utama dari petisi singkat ini adalah agar Timor-Leste disatukan dengan Indonesia tanpa dilakukannya sebuah referendum. Kelompok itu pun diterbangkan seluruhnya ke Jakarta dengan pesawat militer untuk menyampaikan petisi tersebut kepada Presiden Soeharto.³⁷⁷ Pada 7, Juni Arnaldo dos Reis Araújo, Guilherme Gonçalves, Francisco Xavier Lopes da Cruz, dan Mario Carrascalão menyerahkan petisi itu kepada Soeharto di Jakarta.

279. Pada 24 Juni, sebuah misi pencarian fakta para pejabat Indonesia dan sekelompok diplomat internasional yang terdiri atas sepuluh orang^{*} mengunjungi Dili, dengan didampingi oleh wartawan Indonesia dan wartawan asing, konon untuk memastikan keabsahan petisi tersebut. Ketua Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi juga diundang, tetapi ia menolak untuk bergabung dalam misi tersebut. Australia, AS, dan Jepang juga menolak untuk berpartisipasi, walaupun Selandia Baru mengirim seorang perwakilan untuk mengamati (lihat Bab 7.1: Hak penentuan nasib sendiri, untuk isi laporan Perwakilan Selandia Baru dan analisa dari proses tersebut). Misi itu mengunjungi Timor-Leste selama satu hari. Mereka menghadiri upacara di mana Kepala PSTT Arnaldo dos Reis Araújo menyampaikan pidato, dan kelompok itu mengunjungi beberapa kota yang dekat dengan Dili. Kunjungan mereka diawasi dengan ketat dan interaksi bebas dengan orang Timor, termasuk para anggota Majelis Rakyat, tidak diperbolehkan.³⁷⁸ Walaupun demikian, misi itu melaporkan bahwa sebuah pemerintahan yang efektif telah berjalan dengan baik dan Dewan Perwakilan Rakyat berjalan sebagai “alat demokrasi”. Misi itu juga menemukan adanya keinginan untuk melakukan integrasi tanpa referendum, yang mereka anggap sebagai mekanisme yang asing bagi orang Timor.³⁷⁹ Pada 17 Juli 1976, Presiden Soeharto menandatangani undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), meresmikan tindakan Indonesia mengintegrasikan Timor-Leste.[†]

280. Indonesia menyebut ini sebagai sebuah tindakan penentuan nasib sendiri yang sah. Tindakan ini tidak diakui oleh Portugal ataupun PBB, dan pada 1 Desember 1976, Sidang Umum PBB mengesahkan Resolusi 31/53 yang menolak aneksasi Indonesia atas Timor-Leste dan menegaskan kembali seruannya bagi suatu tindakan penentuan nasib sendiri yang dapat diterima secara internasional.

.....
^{*} Anggota-anggota internasional misi tersebut adalah Duta Besar Korea Selatan, Malaysia, Suriah untuk Jakarta, *charge d'affaires* dari Afghanistan dan Irak, serta para perwira yang mewakili Panama, Yaman Selatan, dan India.

[†] Undang-Undang No. 7/1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur.

Operasi Seroja berlanjut—pesawat Bronco OV-10 buatan AS mulai digunakan

281. Sekitar pertengahan hingga akhir 1976, pesawat serangan udara ke darat Bronco OV-10 pertama buatan AS tiba di Indonesia.³⁸⁰ Kekuatan udara menjadi bagian penting dari strategi ABRI di Timor-Leste. Albino do Carmo, Komandan Falintil di gunung daerah Bobonaro-Covalima, mengingat:

Pada bulan Agustus [1976] ABRI berusaha menyerang Gunung Lakirin lagi. Satu kompi bersama Hansip [pertahanan sipil] muncul. Saya datang untuk melihat dan mengusir mereka. Dua komandan bagian saya terbunuh. Kami saling menembak, hanya berjarak 10 - 20 meter. Kemudian ABRI berusaha menguasai gunung yang lain, dari Suai mereka masuk wilayah Gunung Fohorua. Mereka memasuki wilayah tersebut tiga kali. Setiap kali kami mengusir mereka... Mereka menggunakan pesawat pengebom di Lela, di mana saya bermarkas. Pesawat-pesawat tersebut hanya meluncurkan roket-roket besar... Setiap minggu mereka menembaki tempat kami, penduduk sipil, sekolah. Mereka mencari lokasi yang penuh orang. Kerap kali mereka bahkan menembaki ternak. Mereka melakukannya dengan senapan mesin.³⁸¹

282. Penembakan dan pengeboman udara digunakan untuk “memperlunak” berbagai sasaran menjelang sebuah serangan darat oleh pasukan infanteri. Di Lolotoe, José Pereira mengingat perubahan dari penggunaan helikopter sampai bom-bom besar dan akhirnya Pesawat Bronco OV-10 buatan AS:

Pada tahun 1976, ABRI telah menggunakan pesawat terbang dan bom. Tahun 1976 - 1977 sering kali, dua atau tiga kali seminggu. [Pesawat udara] terbang cukup rendah. Pertama mereka menggunakan helikopter dan menembak. Mereka juga menggunakan pesawat terbang hitam besar. Mereka memakai bom. Dan ketiga mereka memakai pesawat udara besar dengan lubang di bagian belakang [Bronco OV-10]. Pesawat-pesawat ini dipakai sejak tahun 1976, kira-kira dimulai sekitar Agustus.³⁸²

283. Penggunaan kekuatan udara memberikan tekanan yang sangat besar kepada Fretilin, karena kekuatan bersenjata Falintil hanya senjata ringan. Ini menjadi faktor utama yang membuat penduduk sipil di gunung menyerahkan diri, dan memberikan kemenangan militer kepada ABRI atas Fretilin/Falintil pada 1979.

Kebuntuan militer, akhir 1976

284. Pada akhir 1976, militer Indonesia mampu menguasai koridor jalan-jalan utama; jalur selatan dari Dili ke Ainaro dan Betano; jalur Baucau-Viqueque; jalur Manatuto-Laclubar, dan jalur Lautém ke Tutuala. Walaupun ABRI cukup menguasai daerah-

daerah yang dapat dijangkau melalui jalan pesisir utara tersebut, berbagai daerah yang luas di pedalaman tetap berada di luar kekuasaan ABRI. ABRI mengharapkan dengan cepat dan mudah menguasai Timor-Leste, namun sebaliknya malah menghadapi perlawanan sengit dan amat baik dari Fretilin/Falintil. Perkembangan usaha ABRI untuk menguasai Timor-Leste berjalan lambat.

285. Walaupun Indonesia sudah menggunakan kekuatan udara tambahan yang dipasok dari Amerika Serikat, situasi pada akhir 1976 itu pada dasarnya merupakan kebuntuan. Pada April 1976, sebuah laporan dari kedutaan besar Amerika mengemukakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi ABRI:

Jenderal Yogi (Soepardi, Asisten Perencanaan, Departemen Pertahanan)...memperkirakan kekuatan Fretilin sekitar 3.000 dengan hanya 5.000 dari 15.000 pucuk senjata yang sejauh ini disita oleh Indonesia. Indonesia belum-belum sudah mengalami terkurasnya sumberdaya, dengan kekurangan pasokan amunisi untuk senjata ringan, artileri, tank, dan meriam angkatan laut.³⁸³

“Pengepungan dan penghancuran”: tahap akhir Operasi Seroja 1977 - 1979

Tinjauan

286. Fretilin menghadapi persoalan besar mengenai apa yang harus mereka lakukan dengan penduduk sipil yang berjumlah besar di berbagai basis mereka di pedalaman. Beberapa orang berpendapat bahwa sudah saatnya untuk mengubah strategi, dan memperbolehkan penduduk sipil menyerahkan diri dan kembali bermukim di kota. Pertentangan mengenai masalah ini menyebabkan terjadinya perpecahan berdarah dalam tubuh Fretilin dan disingkirkannya Presiden Francisco Xavier do Amaral pada Agustus 1977. Penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan sewenang-wenang dilakukan oleh Fretilin selama periode ini.

287. Pada paruh kedua 1977, operasi militer Indonesia semakin gencar, yang mencakup penghancuran sumber makanan di pedalaman untuk memisahkan masyarakat sipil dari resistansi bersenjata. Operasi ini mengakibatkan kematian masyarakat sipil dalam jumlah yang tak terkira akibat serangan langsung serta kelaparan dan wabah penyakit akibat dihancurkannya basis-basis Fretilin dan sumber makanan.

288. Dengan mundurnya Fretilin ke sejumlah kecil daerah yang lebih sempit, ABRI meluncurkan Operasi Cahaya, dengan maksud untuk memaksa para pemimpin utama Fretilin menyerah bersama penduduk sipil yang tersisa.³⁸⁴ Gunung Matebian di wilayah timur dan beberapa wilayah di Suai dan Ermera di wilayah barat menjadi ajang pengeboman udara yang paling gencar, yang mengakibatkan kematian skala besar dan pada akhirnya penyerahan diri puluhan ribu penduduk sipil. Para

pemimpin utama Fretilin ditangkap, menyerahkan diri, atau dibunuh, sehingga resistansi bersenjata yang tersisa kacau-balau. Presiden Fretilin Nicolau Lobato terbunuh dalam pertempuran 31 Desember 1978.³⁸⁵ Xanana Gusmão berhasil lolos ke timur. ABRI melanjutkan operasi penumpasan sampai pada awal 1979, dan pada Maret 1979 menyatakan wilayah ini sudah ditaklukkan.

Penduduk sipil di gunung-gunung

289. Pada akhir 1976 kehidupan dalam zona bebas (*zonas libertadas*) yang dikuasai Fretilin amat berat bagi rakyat sipil, tetapi pada umumnya mereka tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Militer Indonesia masih belum dapat secara permanen mengukuhkan kehadirannya di sejumlah wilayah pedalaman tempat berbagai zona ini berada. Penduduk sipil bersama Fretilin telah mampu menjalankan suatu fungsi dasar masyarakat yang dapat menyediakan berbagai kebutuhan pokok rakyat.³⁸⁶ Fokus mereka adalah menanam tanaman pangan serta pemberian perawatan kesehatan dasar dan pendidikan bagi anak-anak. Komisi mendengarkan kesaksian ahli dari Gilman dos Santos, seorang pegawai negeri pemerintahan tingkat provinsi Indonesia yang bekerja dengan masyarakat pengungsi pada akhir 1970-an dan kemudian menjadi staf LSM Amerika Catholic Relief Services:

Menurut perhitungan saya, situasi pangan di hutan antara tahun 1975 dan 1977 tidak begitu buruk. Orang-orang tidak mengalami banyak masalah karena pada waktu itu mereka masih dapat bergerak dan bebas menanam tanaman sesuai musim. Mereka dapat menghasilkan bahan makanan. TNI hanya menguasai kota-kota kabupaten dan kecamatan, meskipun TNI melakukan serangan ke hutan-hutan.³⁸⁷

290. Keadaan ini berubah secara dramatis dalam paruh kedua 1977.

Kapasitas ABRI terkuras dan kepercayaan diri awal Fretilin

291. Menyusul situasi kebuntuan militer antara pasukan Indonesia dan Fretilin pada akhir 1976, ABRI tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya tersebar di seluruh Nusantara pada awal 1977. ABRI terpaksa menarik sebagian pasukannya dari Timor-Leste untuk mendukung sejumlah operasi di Irian Jaya, Kalimantan Barat, dan Aceh. ABRI juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan pada pemilihan anggota DPR Indonesia pada Mei, dan ABRI menempatkan kira-kira 100 batalion di seluruh negeri.³⁸⁸ Berbagai pengaruh eksternal ini benar-benar memengaruhi kemampuannya untuk menjalankan beberapa operasi tempur di Timor-Leste. Pengurangan pasukan ini dilaporkan dalam dokumen militer Indonesia:

Dalam kerangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 1977 total kekuatan TNI di Timor-Leste berkurang hingga sepertiga yang ada [yang lain ditugaskan] sebagai petugas keamanan pemilihan umum tahun 1977 di bagian lain di Indonesia.³⁸⁹

292. Bukti dan berbagai laporan Fretilin di bawah ini menengarai bahwa antara Maret dan Juni 1977 terjadi pengurangan pasukan ABRI dan sejumlah operasi tempur yang cukup berarti.

293. Ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Fretilin. Selama paruh pertama 1977, Radio Maubere Fretilin berulang kali menyiarkan pemberitahuan mengenai rendahnya semangat Indonesia dan berbagai kemenangan Falintil. Pada 20 Mei, misalnya, Menteri Informasi dan Keamanan Nasional Alarico Fernandes melaporkan melalui radio bahwa 1.500 tentara Indonesia telah ditarik mundur dari wilayah itu.³⁹⁰ Pada 4 Juni dia melaporkan:

Serangan-serangan utama Indonesia yang terakhir terjadi sejak November [1975] hingga Februari [1976]. Meskipun mengerahkan ribuan pasukan, serangan-serangan ini dikalahkan dengan meminta banyak korban pasukan Indonesia... Sejak bulan Februari, serangan-serangan Indonesia dilakukan dengan skala kecil, yang bertujuan meraih sedikit kesuksesan menghancurkan posisi Fretilin di pegunungan dengan mengabaikan kota-kota yang dikuasai Indonesia.³⁹¹

294. Sementara propaganda Fretilin membesar-besarkan keberhasilannya, paruh pertama 1977 relatif merupakan periode yang positif bagi Resistansi. Pada Mei, Alarico Fernandes menyatakan bahwa:

Produksi makanan di wilayah yang dikuasai Fretilin adalah sektor lain yang dibangun bersamaan dengan perjuangan bersenjata. Kami telah mencapai produksi maksimum yang diraih pada masa dominasi kolonial Portugis, ketika terjadi kelaparan dan penyakit... Penduduk di Timor-Leste bekerja keras melakukan rekonstruksi nasional. Kelaparan tidak sebanyak sebelumnya.³⁹²

Amerika Serikat memimpin dalam mempersenjatai-ulang militer Indonesia

295. Pada awal 1977 sebuah delegasi subkomite Kongres Amerika Serikat mengunjungi Timor-Leste. Kunjungan mereka diatur dengan seksama oleh militer Indonesia, dengan membatasi mereka ke berbagai daerah yang sudah mantap berada di bawah penguasaan Indonesia. Mereka tidak berupaya untuk bertemu dengan Fretilin ataupun sejumlah besar penduduk sipil di wilayah pedalaman. Selama masa kunjungan mereka sangat sedikit terjadi operasi tempur. Delegasi ini “tidak membuat kesimpulan tegas” sehubungan dengan perang.³⁹³ Pada 1978, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Zbigniew Brzezinski memerintahkan agar “tekanan” terhadap masalah hak asasi di Indonesia diredam.³⁹⁴ Selanjutnya selama 1978, Amerika Serikat dan pemerintah asing lainnya memberikan dukungan militer yang luas untuk Indonesia. Pada Januari, Amerika Serikat mengumumkan penjualan 16 unit F5,

sebuah Skuadron A4, dan sebuah fasilitas pembuatan senapan M-16.³⁹⁵ Pada tahun yang sama Inggris mengumumkan niatnya untuk memasok pesawat Jet Hawk untuk serangan darat,³⁹⁶ sementara Australia memasok helikopter serta pesawat angkut.³⁹⁷ Ini menjadi pertanda yang jelas bagi Indonesia bahwa negara-negara Barat tidak menentang operasi militernya di Timor-Leste.

296. Pada 1979, Amerika Serikat berusaha untuk menjelaskan kebungkamannya mengenai penggunaan berbagai senjatanya di Timor-Leste atas dasar bahwa perang tersebut sudah selesai. Sumbernya untuk membuat kesimpulan ini adalah militer Indonesia:

Beberapa perlengkapan militer yang dipasok Amerika Serikat saat ini ada di Timor-Leste. Meskipun demikian, skala dan frekuensi perselisihan di Timor-Leste sudah begitu berkurang, sehingga menurut informasi terbaik yang ada perlengkapan itu sangat jarang digunakan dalam pertempuran.³⁹⁸

Perpecahan internal Fretilin dan pembersihan berdarah

297. Meski ada optimisme pada awal 1977, Fretilin menghadapi permasalahan dan perpecahan internal, yang berakibat pada terjadinya kekerasan. Pada 1976⁹ partai tersebut membunuh Aquilino Soares, *liurai* Quelicai, atas tuduhan menempatkan kepentingan lokal di atas kepentingan nasional.³⁹⁹ Belakangan pada tahun yang sama, satu lagi unit yang memisahkan diri, yang dipimpin Francisco Hornai di Iliomar, juga ditangkap dan dibunuh.⁴⁰⁰ Berbagai kejadian ini merupakan indikasi awal adanya perbedaan pandangan di antara para pemimpin Fretilin mengenai bagaimana menjalankan perjuangan, dan pertanda awal berbagai kekerasan yang akan digunakan oleh Fretilin untuk mendisiplinkan para kadernya.⁴⁰¹

298. Pada akhir 1977 perawatan kepada orang yang sakit dan terluka, serta penyediaan makan kepada penduduk sipil, menjadi beban yang semakin berat bagi Fretilin. Presiden Fretilin ketika itu, Francisco Xavier do Amaral, mengatakan kepada Komisi bahwa kurangnya obat-obatan, bahkan untuk penyakit yang biasa, mengakibatkan semakin banyak penduduk sipil mati.⁴⁰²

299. Para anggota Komite Sentral Fretilin tidak sepaham mengenai beberapa persoalan, ketika para kader politik dan militer berselisih mengenai siapa yang seharusnya mengatur perjuangan. Yang menjadi kontroversi utama adalah peran penduduk sipil. Bagi para pemimpin Falintil, keharusan membela penduduk sipil dalam jumlah besar membatasi kemampuan mereka melakukan berbagai ofensif yang efektif. Presiden Fretilin Francisco Xavier do Amaral mendukung pandangan ini, dan menganggap perlu diambil suatu tindakan untuk menghindari penghancuran, dan sebagian besar penduduk diperbolehkan untuk menyerahkan

* Sumber bulan bermacam-macam; Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 95 mengatakan November, sementara Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, mengutip Gusmão, *To Resist*, mengatakan Maret.

diri dan melanjutkan resistansi dari berbagai kota dan desa. Para anggota Komite Sentral lainnya yakin bahwa rakyat adalah komponen penting dalam perjuangan rakyat, khususnya untuk memungkinkan partai melakukan revolusi sosial yang berdasar pada pendidikan politik bagi semua.⁴⁰³

300. Pada Agustus 1977, Komite Sentral Fretilin bertemu di Laline (Lacluta, Distrik Viqueque) dan bersepakat mengenai prinsip mengandalkan kekuatan sendiri. Dengan tidak adanya kemungkinan dukungan dari luar, Resistansi memutuskan untuk memerangi ABRI sendiri. Terjadi pertentangan mengenai masalah ini. Menteri Informasi Alarico Fernandes menganggap kemerdekaan tidak mungkin dicapai tanpa dukungan dari luar.⁴⁰⁴ Presiden Fretilin Francisco Xavier do Amaral, yang mengambil sikap beroposisi, tidak menghadiri rapat di Laline. Tidak lama kemudian, pada September 1977, Fretilin menangkap dan memecatnya sebagai Presiden. Amaral menceritakan kejadian itu kepada Komisi:

Jadi seperti inilah ide saya. Kami harus mengirim penduduk untuk menyerah. Hanya laki-laki yang kuat dan dapat bertempur di peperangan tetap tinggal bersama Komite Sentral. Karena kami tidak tahu berapa tahun lagi perang ini berakhir...[Pada 1976] mulai ada perbedaan pendapat dalam Fretilin....Beberapa orang berkata bahwa doktrin [Fretilin] ini tidak benar. Beberapa orang menyatakan bahwa doktrin ini benar tetapi orang-orang tidak mengikutinya secara tepat. Beberapa berkata doktrin ini baik. Kami mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain...Sejak saat ini mereka menangkap saya, memenjarakan saya, dan menuduh saya...Bahwa saya mengirim penduduk untuk menyerah supaya di masa yang akan datang ketika saya menyerahkan diri kepada Indonesia, Indonesia akan memberikan jabatan sebagai jenderal atau menteri kepada saya. Inilah argumen mereka yang menyerang saya...⁴⁰⁵

301. Suatu perintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Nicolau Lobato menuduh Francisco Xavier do Amaral sebagai seorang pengalah dan pengkhianat, serta “kejahatan-kejahatan” lain seperti korupsi, poligami, sabotase, kekerasan, feodalisme, dan pembunuhan.⁴⁰⁶ Dia juga dituduh memulai gerakan saingan yang akan melemahkan Fretilin. Dia dipenjara di sebuah lubang, dipukuli, dan diperlakukan dengan kejam.⁴⁰⁷ Akibat serangan ofensif ABRI, Francisco Xavier do Amaral melarikan diri pada 1978, dan belakangan ditangkap oleh ABRI.

302. Pada 16 Oktober, Nicolau Lobato terpilih sebagai presiden baru. Tekanan dalam periode ini mendorong Fretilin mengadopsi ideologi yang lebih radikal. Marxisme diumumkan,⁴⁰⁸ dan bersamaan dengan itu muncul sikap yang tidak toleran pada perbedaan pendapat. Penangkapan Amaral menjadi awal dari pembersihan di dalam tubuh Fretilin.⁴⁰⁹ Terjadi berbagai eksekusi publik,⁴¹⁰ dan banyak orang yang ditahan, diperlakukan dengan kejam dan dipaksa untuk mengadukan orang lain.⁴¹¹ Siapapun yang diketahui berhubungan dekat dengan Amaral atau yang berkolaborasi dengan militer Indonesia, ditangkap dan ditahan

(lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, dan Bab 7.4.: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan).

ABRI mengintensifkan operasi militer: pengepungan dan penghancuran, (Agustus 1977 sampai Agustus 1978)

303. Operasi militer antara pertengahan 1977 sampai pada awal 1979 sering disebut sebagai kampanye “pengepungan dan penghancuran.” Kampanye tersebut punya dua tujuan, yaitu untuk menghancurkan kepemimpinan Fretilin dan memaksa penduduk sipil yang tinggal di pedalaman bergunung-gunung menyerahkan diri kepada ABRI di dataran rendah.⁴¹²

304. Pada Agustus 1977, ABRI melancarkan operasi militer besar baru,⁴¹³ yang didahului dengan pengerahan pasukan yang besar.⁴¹⁴ Data Komisi menunjukkan peningkatan dari tiga sampai lima batalion pada Juli, menjadi tujuh belas batalion pada Agustus. Fokus awal dari ofensif ini adalah sektor barat, yang dikenal dengan nama sandi Operasi Sisir.⁴¹⁵ Seperti pada berbagai operasi sebelumnya, dukungan artileri Angkatan Laut dan Udara adalah faktor penting bagi kemenangan ABRI. Di Fatumean, misalnya, pengeboman udara adalah alasan utama menyerahnya pasukan Falintil/Fretilin dan penduduk sipil pada November.⁴¹⁶ Di sektor timur, Marinir menjalankan Operasi Bedah Marinir 77 dengan tujuan untuk menguasai jalur antara Quelicai dan Uato Carbau.⁴¹⁷

Penghancuran sumber pangan, Fretilin mundur ke gunung bersama penduduk sipil

305. Militer Indonesia bergerak keluar dari kota dan koridor jalan yang telah mereka kuasai pada bagian pertama Operasi Seroja. Fretilin terpaksa mundur, dan bukannya menyuruh penduduk untuk menyerah, Fretilin memutuskan untuk membawa serta penduduk sipil dengan mereka. Komisi diberitahu mengenai pembunuhan ternak dan penghancuran sumber pangan lainnya oleh militer Indonesia selama operasi-operasi ini. Manuel Carceres da Costa dari Lacló, Distrik Manatuto, bersaksi:

Ketika kami menebang sebuah pohon sagu, datang prajurit Indonesia dan menyerang kami... Ketika tentara menembak seorang anggota Falintil bernama Hermenegildo, kami terpaksa meninggalkan makanan kami dan melarikan diri. Setelah serangan itu, militer Indonesia menduduki daerah tersebut sehingga kami tidak dapat kembali lagi. Kerbau-kerbau dan ternak kami semua ditembak mati atau diusir. Kebun-kebun dan sawah kami dihancurkan.⁴¹⁸

306. Pengeboman udara juga dilakukan terhadap lahan pertanian, sehingga memaksa Fretilin dan penduduk sipil mundur lebih jauh ke gunung-gunung, dan membuat

* Hal ini melibatkan Batalion Infanteri 131, 511, 527, 612, 621, 733, dan 741.

hidup menjadi semakin sulit. Dengan tanaman pangan hancur, dan penduduk sipil tidak lagi dapat tinggal di permukiman tempat mereka dapat bercocok tanam, tetapi terpaksa harus tetap bergerak, banyak orang kemudian mati. Komisi mendengar banyak kesaksian mengenai penderitaan berat dan ketidakberdayaan penduduk sipil di gunung selama operasi militer ini. Orang tua dan anak-anak adalah yang paling banyak mati.⁴¹⁹ Militer Indonesia mematahkan basis-basis resistensi Fretilin (*bases de apoio*) satu per satu, dan penduduk yang tersisa mundur ke daerah-daerah yang makin terpojok. Kehadiran demikian banyak penduduk sipil membuat Fretilin harus memikirkan perlindungan mereka, sehingga mengurangi kemampuannya melakukan serangan balasan kepada ABRI.

Serangan di wilayah tengah

307. Militer Indonesia terus melancarkan serangan selama musim hujan dan selama paruh pertama 1978. Jumlah pasukan di wilayah tengah, yang sebelumnya hanya sedikit, ditambah sampai sebanyak yang berada di barat. Beroperasi di bawah komando Resimen Tempur (RTP) 11, pasukan ini melancarkan sebuah serangan di daerah Same-Kablaki-Fatuberliu.⁴²⁰ Tapi, di bagian timur, jumlah pasukan tetap jauh lebih sedikit, dengan hanya empat sampai lima batalion.* Selama musim hujan, pasukan di timur menyerang pertahanan Fretilin di perbatasan Baucau-Viqueque antara Gunung Ossoala dan Gunung Mundo Perdido, dan juga melanjutkan penyerangan di bagian utara kaki Gunung Matebian.⁴²¹ Selama periode ini kekuatan angkatan udara[†] digunakan di sektor barat dan tengah:⁴²²

Setelah pengeboman atas Kablaki mereka pergi ke Dululau dan Mamelau ... Empat pesawat udara mengebom Dululau, dan ... roket dan ... meriam.⁴²³

308. Komisi mendengar kesaksian langsung para korban yang selamat dari berbagai serangan pengepungan ini, di mana banyak penduduk sipil yang mati. Maria José da Costa menceritakan kepada Komisi mengenai pengalamannya di wilayah pegunungan tengah:

Pada tahun 1978 musuh mengepung kami di Dolok dan banyak orang meninggal karena kelaparan. Semua persediaan makanan milik rakyat dibakar. Mereka mengepung kami dengan menyerang dari laut dengan kapal perang, dari udara dengan pesawat terbang, dan dari darat dengan membakar alang-alang dan mengirim pasukan angkatan darat. Pada waktu itu bulan Agustus yang merupakan musim kemarau. Tentara membuat api yang besar yang menjalar dengan cepat ibarat menyempatkan bensin ke alang-alang. Banyak orang mati karena tidak dapat menghindari api yang mengepung kami.⁴²⁴

* Termasuk Batalion Infanteri 502 dan 503 Kostrad, Batalion Infanteri 408, dan satu Batalion Infanteri Marinir.

† Pesawat Bronco OV-10 yang disalurkan oleh AS.

309. Tekanan dari pengepungan dan serangan yang tiada henti menciptakan gelombang manusia yang perlahan-lahan menyerahkan diri kepada militer Indonesia.

Operasi (atau Gerakan) Cahaya, dengan sasaran para pemimpin Fretilin

310. Pada 6 April 1978, Letnan Jenderal Mohammad Yusuf ditunjuk sebagai Panglima ABRI. Dia mengambil alih kendali secara pribadi berbagai operasi di Timor-Leste, memotong wewenang Moerdani dan Kalbuadi.⁴²⁵ Di musim kemarau pada Mei 1978, Operasi Cahaya pun dilancarkan.⁴²⁶ Operasi baru ini secara khusus menargetkan para pemimpin Fretilin. Tujuannya adalah agar para pemimpin yang berpengaruh menyerahkan diri sehingga masyarakat pun ikut menyerahkan diri secara besar-besaran, dengan demikian memisahkan masyarakat dari para gerilya. Komisi mendengar kesaksian Xanana Gusmão bahwa Operasi Cahaya ini lebih tepat disebut sebagai sebuah “gerakan”, dan bahwa Menteri Informasi dan Keamanan Fretilin Alarico Fernandes merupakan sekutu utama militer Indonesia setelah dia menyerahkan diri pada September 1978:

Pada bulan Oktober atau November 1978 kami yang dikepung mendengar bahwa Alarico sudah melaksanakan [Operasi] Cahaya ... Kami mendengar di radio bahwa Alarico sudah melakukan gerakan... Dia bisa melihat bahwa Indonesia sangat kuat dan dia mengikuti Indonesia dan mencanangkan [Operasi] Cahaya.⁴²⁷

311. Walaupun secara geografis konflik ini terus berubah sampai awal 1978, seiring berjalannya waktu dan Resistansi semakin terdesak ke daerah yang lebih sempit, sifat konflik ini berubah menjadi suatu pengepungan. Karena semakin terdesak, para pemimpin Fretilin berupaya untuk mempertahankan resistansi yang terpadu. Sebuah naskah pidato Nicolau Lobato pada 20 Mei 1978 menunjukkan tekanan yang dihadapi Fretilin:

Akan tetapi mereka yang tidak bisa diyakinkan akan fakta tentang pertanyaan yang tidak bisa dijawab bahwa perjuangan kita adalah adil dan benar, bagi mereka yang berposisi dan bekerjasama secara fanatik dengan musuh untuk mengakhiri perjuangan kita, beberapa dari mereka yang telah gagal dalam hidup, mereka adalah bukan anggota Fretilin, mereka bukan bagian dari rakyat Maubere, mereka adalah musuh rakyat, mereka adalah pengkhianat Ibu Pertiwi. Persatuan ideologi yang telah diumumkan hanya akan dinyatakan ketika kita melaksanakannya secara praktis. *

* Dalam: Nicolau dos Reis Lobato, *Fretilin é a Liberdade do Povo em Marcha, Discursos*, Edições Comité 28^{de} Novembro, Lisabon, tak bertanggal (mungkin 1979, setelah komunike resmi dari Fretilin yang mengumumkan kematian Nicolau Lobato, 6 Mei 1979), hal.59. Naskah ini kemudian disiarkan melalui radio dan ringkasannya dikirim ke Perwakilan Amerika Serikat di PBB, menyatakan: “Lobato menyerukan, antara lain, persatuan rakyat Timor-Leste, semua pejuang dalam Komite Sentral Fretilin,

Operasi militer Indonesia di wilayah tengah dan timur, akhir 1978: Jatuhnya Matebian

312. Titik balik utama dalam operasi terjadi pada pertengahan 1978. Antara Agustus dan Desember 1977, pasukan tempur terkonsentrasi di sektor barat, dan selama paruh pertama 1978 pasukan tempur tersebar dengan jumlah yang sama kuat di sektor barat dan pusat; sementara pengerahan pasukan di timur jauh lebih rendah. Pada pertengahan 1978, perimbangan kekuatan akhirnya bergeser ke timur, dengan 13 batalion tempur yang ditugaskan di timur di bawah komando RTP 18 Kostrad.⁴²⁸ Pengerahan ini melanjutkan proses pengepungan penduduk dan memuncak pada penyerangan terhadap Gunung Matebian. Operasi ini diatur dengan seksama, melibatkan sejumlah batalion Kostrad, batalion infanteri teritorial nonorganik (eksternal), batalion bantuan tempur, Marinir, dan Angkatan Udara. Seorang mantan perwira Kostrad yang diwawancarai di Indonesia menceritakan tentang taktik yang digunakan selama penyerangan di Gunung Matebian:

Semua unit memiliki rute mereka sendiri dan menyerang dari berbagai arah. Sebelum melaksanakan serangan mereka berkoordinasi untuk menghindari saling-tembak antarunit. Kami berencana menyerang pada waktu yang bersamaan dengan memakai formasi L. [Ini] semua dilakukan dengan pertimbangan keamanan dalam upaya menghindari terbunuhnya kawan seperjuangan kami.⁴²⁹

313. Ini menjadi serangan terbesar terakhir dalam operasi pengepungan dan penghancuran. Fretilin telah mempersiapkan Matebian sebagai wilayah pemunduran, dengan persediaan makanan. Ketika kampanye ini dimulai, Fretilin membawa orang-orang ke gunung, yang dipertahankan dengan kuat. Wilayah ini pada akhirnya jatuh pada 22 November, zona bebas terakhir yang ditundukkan.

314. Yang menjadi kunci kemenangan dalam serangan di Gunung Matebian adalah pengeboman udara dengan menggunakan pesawat Bronco OV-10, F-5, dan Sky Hawk A-4. Sebagian besar sumber mengatakan bahwa pengeboman udara di Gunung Matebian dimulai pada September atau Oktober 1978 dan berlangsung hingga pertengahan November.⁴³⁰ Banyak pernyataan yang menggambarkan pengeboman yang tidak pandang bulu terhadap penduduk sipil dan pembantaian yang membinasakan.⁴³¹ Tomas Soares da Silva, yang pada saat itu berumur 16 tahun, menceritakan pengeboman di Gunung Matebian itu:

Di Gunung Matebian, pengeboman mulai terjadi bulan Oktober dan November. Satu [jenis] bom adalah bom gas. Apabila para pengebom menjatuhkan bom-bom tersebut pada pagi hari, banyak orang menjadi korban. Kita dapat melihat kapan terjadi ledakan ketika

dan menyerukan persatuan ideologis. Persatuan ideologis yang dicanangkan hanya akan menjadi tulus ketika kami (Fretilin) menerapkannya." Juga, bahwa mereka yang tidak masuk dalam Fretilin adalah musuh penduduk—(mereka adalah) "pengkhianat ibu pertiwi [sic]". Telegram, Misi AS di PBB New York kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, East Timor Question, 7 Juli 1978.

*rumput terbakar. Bom-bom membakar rumput, dan di wilayah ini semuanya dihancurkan. Bilamana terjadi ledakan baunya seperti solar atau bensin.*⁴³²

Penyerahan diri: Turun dari Matebian

315. Pada pertengahan November, pengeboman itu memaksa para pemimpin Fretilin menyerukan penduduk sipil untuk menyerahkan diri kepada musuh. Dalam otobiografinya Xanana Gusmão menulis:

Segera musuh bergerak maju dan saya dikirim ke barat Matebian. Ledakan, kematian, bombardir, tangisan, dan mundur. Namun orang-orang tenang: mungkin pasrah, mungkin kami semua benar-benar siap untuk mati di sana. Pasukan kami mundur dan musuh merangsek maju. Suatu dini hari, saya terbangun karena pengeras suara Pasukan Indonesia, yang menyerukan nama saya: “Adjunto Xanana, tidak perlu meneruskan pertempuran. Perintahkan orang-orang untuk menyerah!” Mereka masuk dari Uato Carbau sepanjang malam dan menguasai titik strategis.⁴³³

316. Pada 22 November, diambil keputusan untuk menyerahkan diri di Matebian. Ketika penduduk sipil menuruni puncak gunung dan lembah panjang yang memisahkan Matebian Mane dan Matebian Feto, mereka disambut oleh para pasukan yang sudah menunggu. Beberapa orang dimasukkan ke kamp penahanan sementara, yang lainnya diinterogasi, dan yang lainnya disuruh kembali ke daerah asal mereka, baik di bawah pengawasan atau kembali sendiri.

317. Walaupun beberapa komandan Falintil seperti Xanana Gusmão berhasil lolos, hal ini mememorakporandakan perlawanan Fretilin/Falintil. Dampak kehancuran dari kekalahan Fretilin sangat besar, dan Operasi Cahaya pada akhirnya mencapai beberapa kesuksesannya yang paling penting. Setelah sebelumnya Alarico Fernandes menyerah pada September, empat anggota Komite Sentral lainnya menyerahkan diri pada akhir 1978 di Sektor Tengah Utara, di Remexio. Dengan penyerahan diri Alarico Fernandes, Fretilin kehilangan satu-satunya radio, yang merupakan alat koordinasi yang sangat penting. Kesuksesan utama ABRI diraih pada 31 Desember 1978 ketika tim Kopassus berhasil menyergap Presiden Fretilin Nicolau Lobato yang mengakibatkan luka parah, di sebuah sungai dekat Maubisse.⁴³⁴

318. Komisi mendengar kesaksian ahli dari Pat Walsh mengenai hasil intensifikasi kampanye militer ini:

.....
* Kesaksian semacam ini menegaskan penggunaan bahan kimia terhadap penduduk sipil yang ditargetkan oleh pasukan udara Indonesia. Komisi memegang rekaman dokumenter mengenai pesawat OV-10 yang sedang dimuati dengan bom berlabelkan ‘Opalm’ (*napalm* dalam versi Soviet) di pelabuhan udara Baucau pada akhir 1970-an.

*Dari sudut pandang militer, ofensif ini sangat berhasil dalam menghancurkan Resistansi, meski sementara. Dari sisi kemanusiaan, ofensif ini merupakan bencana.*⁴³⁵

Setelah Matebian: Serangan ABRI di wilayah tengah dan timur

319. Dengan jatuhnya basis Fretilin di Gunung Matebian dan penyerahan puluhan ribu warga sipil, pada awal 1979 militer Indonesia mengalihkan perhatiannya kepada sisa pasukan Fretilin dan penduduk sipil yang masih berada di Fatubesi, Distrik Ermera, dan Gunung Kablaki, yang terbentang di sepanjang perbatasan Ainaro-Manufahi, dan di lembah Sungai Dilor. Serangan ABRI di Fatubesi mengakibatkan perpecahan dalam kepemimpinan Fretilin setempat, dan pada awal Februari salah satu faksinya menyerahkan diri, sementara mereka yang menolak untuk menyerah, terus diburu. Di Gunung Kablaki, operasi infanteri memaksa sejumlah kelompok penduduk sipil yang tersisa untuk turun ke dataran yang lebih rendah di mana mereka menyerahkan diri atau ditangkap oleh pasukan yang sudah menunggu.⁴³⁶

320. Di selatan Manatuto, Marinir, dengan didukung oleh pesawat, melakukan operasi lanjutan, yang diberi nama Operasi Pembersihan.⁴³⁷ Sementara itu, unit militer yang terlibat dalam pengempuran di Gunung Matebian berpindah dari Baucau ke Lautém dalam rangka pencarian sekelompok kecil pemimpin Fretilin dan para tentara Falintil yang lolos dari pengepungan.⁴³⁸ Pada Februari, Mau Lear, pemimpin wilayah Timur, ditangkap dan dibunuh.⁴³⁹ Orang-orang yang tertangkap dalam berbagai operasi ini dibawa ke kamp penampungan. Pada 26 Maret 1979, Operasi Seroja dibubarkan, dan ABRI menyatakan bahwa Timor-Leste “sudah ditaklukkan”.

Penyerahan diri, pemukiman kembali, dan kelaparan

Tinjauan

321. Periode antara akhir 1977 sampai 1979 merupakan masa tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Timor-Leste. Kelaparan hebat terjadi akibat operasi militer besar-besaran Indonesia untuk menumpas Resistansi Fretilin. Tujuan militer lebih penting daripada korban manusia. Pengamat dari luar tidak diperkenankan masuk sampai krisisnya benar-benar memuncak dan jumlah kematian amat tinggi.

322. Penduduk sipil di beberapa gunung menyerahkan diri dalam jumlah besar mulai akhir 1978. Setelah berbulan-bulan hidup selalu dalam pelarian untuk menghindari serangan, dan sumber pangannya dihancurkan oleh militer Indonesia, orang-orang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ketika mereka menyerah. Mereka ditampung dalam kemah-kemah sementara, tanpa persediaan pangan dan obat-obatan yang mencukupi. Penderitaan mereka diperburuk oleh

kontrol militer atas operasi bantuan domestik Indonesia, dan larangan bagi lembaga internasional untuk masuk ke wilayah tersebut. Media internasional juga dilarang. Setelah pemindahan penduduk ke dalam kamp-kamp penampungan, prioritas pihak militer Indonesia atas keamanan sangat membatasi gerak-gerik penduduk sipil sehingga juga membatasi kemampuan mereka untuk bertani dan bercocok tanam pangan, yang semakin memperburuk kelaparan, kematian, dan penderitaan dalam jumlah yang amat besar. Keinginan penguasa untuk memisahkan penduduk sipil dari Fretilin/Falintil mencapai puncaknya dengan pengungsian penduduk sipil ke Pulau Ataúro mulai 1980. Ribuan orang ditahan di pulau penjara itu, dan menderita penyakit dan kelaparan.

323. Setelah penundaan yang cukup lama, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan organisasi nonpemerintah Amerika Serikat Catholic Relief Services (CRS) diizinkan untuk memasuki wilayah tersebut pada akhir 1979. Bekerja di bawah tekanan yang amat tinggi, upaya mereka sedikit banyak meringankan penderitaan penduduk dan menyelamatkan banyak nyawa.

Penyerahan dan eksekusi tahanan

324. Sebagian besar penyerahan terjadi sepanjang 1978 ketika kampanye pengepungan semakin mendekat ke sejumlah posisi Resistansi. Kampanye pengeboman dan pengepungan yang ketat, ditambah tawaran amnesti Presiden Soeharto pada 1977 kepada para pejuang, tekanan akibat Operasi Cahaya, mendorong penyerahan diri sejumlah tokoh Fretilin. Banyak di antara mereka yang awalnya diberi amnesti belakangan menghilang. Di antara mereka terdapat pemimpin-pemimpin terkemuka seperti Sera Key,⁴⁴⁰ juga para kader, seperti mereka yang dieksekusi pada saat menyerahkan diri di Quelicai awal 1979.⁴⁴¹ Ketika turun dari gunung, orang-orang diinterogasi oleh militer Indonesia guna mengidentifikasi dan memisahkan anggota Fretilin dan Falintil. Luis da Costa adalah pastor di gunung pada saat itu. Ia selamat, dan pada 1988 ia bersaksi di Lisbon mengenai penyerahan diri sekelompok kecil orang, yang sebagian besar kemudian dieksekusi:

Orang-orang mulai mati kelaparan, dan kami membawa banyak orang yang terluka, juga anak-anak dan keluarga-keluarga. Ingatan terburuk saya adalah mengenai jasad-jasad yang saya lihat ketika melewati Natarbora pada bulan Desember 1978 – ada jenazah setiap sepuluh meter, jasad-jasad yang mengering dari orang-orang yang mati kelaparan, ada yang berpelukan, ada yang bersandar di pohon-pohon. Saya menyerahkan diri di Barique pada tanggal 13 Maret 1979 dengan enam orang lainnya. Selama sebulan lamanya kami hanya makan dedaunan. Penyerahan diri kami dinegosiasikan melalui perantara. Saya satu-satunya orang yang tidak dieksekusi.⁴⁴²

325. Pada 1981 Administrator Apostolik Timor-Leste, Monsignor Martinho da Costa Lopes menantang Presiden Soeharto dengan bukti-bukti tentang sejumlah penghilangan ini.⁴⁴³

Kamp-kamp penampungan sementara

326. Orang-orang yang tidak dibawa oleh militer kemudian ditahan. Selama akhir 1970-an dan sampai pertengahan 1980-an, berbagai macam kamp digunakan untuk menampung penduduk yang menyerahkan diri. Berbagai kamp ini dikenal dengan banyak nama. Indonesia menyebutnya kamp pemukiman kembali, sementara beberapa pengamat internasional, dan banyak korban selamat orang Timor yang bersaksi di hadapan Komisi, menggunakan istilah 'kamp konsentrasi.' Semua kamp ini memiliki ciri yang sama, yakni penelantaran dan pembatasan kebebasan bergerak. Tujuan penahanan ini adalah untuk memutuskan hubungan antara orang yang telah menyerah kepada ABRI dengan Falintil, untuk memutuskan dukungan penduduk sipil kepada pejuang gerilya, dengan demikian menghancurkan sisa-sisa resistansi yang tercerai-berai di gunung dan hutan.

327. Pada tahap awal penyerahan diri, orang-orang ditampung di mana saja, termasuk di sekolah, toko-toko tua, barak-barak militer, atau bahkan di tempat terbuka. Awalnya tidak ada infrastruktur khusus untuk menampung mereka. Komisi mendengarkan kesaksian ahli dari Gilman dos Santos, yang pada 1977 bekerja untuk pemerintah provinsi:

Orang-orang yang lari ke gunung turun pada tahun 1977, 1978, dan 1979. Mereka yang menyerah atau yang ditangkap oleh militer Indonesia, semuanya ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi, yang sangat tidak layak dihuni manusia mana pun. Orang-orang ditempatkan di tenda-tenda besar darurat, yang dibuat dari daun palem atau rumput, dan mereka menahan semuanya, tanpa membatasi jumlah orang.⁴⁴⁴

328. Orang-orang pada umumnya berada dalam kondisi fisik yang lemah. Mereka sering menyerah setelah pengalaman yang buruk di gunung di mana banyak orang meninggal. Orang-orang yang datang ke kamp, tidak hanya luput dari kematian akibat perang, tapi juga dari kekurangan makan dan obat-obatan. Pengalaman kelaparan berlanjut di sejumlah kamp yang tidak memiliki fasilitas seperti sanitasi ataupun pasokan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang mendesak.

329. Pada 1978, banyak kamp didirikan. Konon tujuan berbagai kamp ini adalah untuk memproses orang-orang yang telah menyerahkan diri sebelum dimukimkan di tempat lain. Menurut teori, proses ini seharusnya memakan waktu tiga bulan. Pengamanan sangat ketat, dan kamp-kamp tersebut dikelilingi oleh pos-pos militer dan Hansip. Gerak-gerik orang umumnya dibatasi pada radius 300 meter, sehingga sangat membatasi kemampuan mereka untuk bercocok tanam atau mengumpulkan makanan. Orang-orang bertahan hidup dengan makanan apa saja yang dapat mereka kumpulkan di sekitar, ubi atau sagu kalau mujur, akar-akar dan umbi-umbian beracun kalau sial (lihat Bab 7.3.: Pemandahan paksa dan kelaparan).

330. Lamanya waktu dalam kamp-kamp ini bervariasi sesuai dengan tingkat kerawanan suatu daerah, dan bergantung pada individu yang ditahan dan persepsi ABRI mengenai ancaman bahaya orang tersebut.⁴⁴⁵

Kamp penahanan jangka panjang dan strategi keamanan ABRI

331. Beberapa kamp penampungan sementara terus dipertahankan sebagai kamp penahanan jangka panjang. Desa pemukiman baru dibangun guna mendukung maksud ABRI menjalankan pemisahan penduduk sipil dari Fretilin dan Falintil. Pada akhir 1979, jumlah penduduk di kamp penahanan melampaui 300.000,⁴⁴⁶ dan bila berbagai angka yang dilaporkan ABRI dari masa itu akurat, bisa saja melampaui 370.000.⁴⁴⁷ Militer perlu mengontrol jumlah orang yang sangat besar ini, sementara itu juga tetap fokus pada tugas menumpas resistansi gerilya bersenjata. Dalam beberapa kasus, kamp-kamp ini dibangun di mana sebelumnya tidak pernah ada permukiman samasekali. Seluruh desa dibawa dan dipaksa pindah, khususnya bila berada di daerah-daerah yang rawan. Pergerakan penduduk sangat dibatasi. Dokumen militer Indonesia dari masa itu menjelaskan bagaimana menjalankan kebijakan ini:

Setiap kali siapapun keluar dari desa, ia harus memiliki surat jalan, dan setiap orang yang masuk ke suatu desa dari desa lain wajib lapor.

Tidak boleh ada kebun atau sawah penduduk yang letaknya jauh dari pemukiman atau desa.⁴⁴⁸

332. Keadaan ini menghasilkan kontrol atas penduduk sipil yang begitu ketat di sejumlah kamp sehingga mereka tidak dapat bercocok tanam sesuai pola tanam yang normal dan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Kontrol ini mengakibatkan penderitaan besar bagi banyak penduduk sipil yang ditahan dalam berbagai kamp ini, dan mengakibatkan kelaparan.⁴⁴⁹

333. Militer Indonesia terus mencurigai adanya hubungan antara penduduk yang ditahan dengan pejuang gerilya Fretilin. ABRI menggunakan anggota Hansip Timornya untuk memantau gerak-gerik penduduk. Hal ini menimbulkan keadaan saling curiga dan ketegangan di beberapa komunitas kamp. Di Dili dan kota-kota tempat penduduk sipil telah kembali, juga terdapat banyak pusat penahanan. Penangkapan sewenang-wenang oleh militer marak terjadi, dan tidak pernah ada pengadilan resmi atas tahanan politik sampai Desember 1983. (Lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, Penyiksaan, dan Penganiayaan; serta Bab 7.6: Pengadilan Politik.) Selama 1979 - 1980 banyak orang yang ditahan kemudian menghilang. Militer Indonesia menggunakan beberapa tempat sebagai lokasi pembunahan, seperti di Quelicai setelah penyerahan diri massal dari Matebian,⁴⁵⁰ dan di pinggiran Dili di Areia Branca dan Tasitolu.⁴⁵¹

Wilayah tertutup

334. Selama periode ini, Timor-Leste ditutup dari dunia luar. Walaupun Indonesia telah menyatakan Timor-Leste sudah ditaklukkan, wilayah ini dalam banyak hal tetap terasa sebagai wilayah perang. Menutupi apa yang sebenarnya terjadi dari publik Indonesia, atau masyarakat internasional yang lebih luas, merupakan komponen penting dari strategi Indonesia untuk menguasai Timor-Leste. Akses media Indonesia ke Timor-Leste dikontrol dengan ketat, dan media internasional praktis dilarang. Lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan internasional tidak diperkenankan masuk ke Timor-Leste, dan delegasi resmi hanya diizinkan datang dalam berbagai kunjungan yang dikontrol ketat.

335. Komisi mendengarkan kesaksian dari Gilman dos Santos, mengenai isolasi ini:

Bahkan wartawan Indonesia tidak diizinkan untuk masuk ke sini. Mengenai telekomunikasi, izin untuk melakukan hubungan telepon jarak jauh atau internasional tidak diberikan. Dengan kondisi seperti ini, tidak ada informasi yang dapat keluar dari sini. Dipisahkannya Timor-Leste dari dunia luar oleh Pemerintah Indonesia, khususnya ABRI, jelas menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia adalah untuk mempersulit masuknya bantuan dari negara-negara lain.⁴⁵²

336. Gereja Katolik merupakan satu-satunya organisasi independen yang tetap berada di Timor-Leste dengan jaringan internasional yang luas. Gereja perlahan membocorkan berita mengenai krisis yang melanda Timor-Leste, biasanya melalui surat-surat yang diselundupkan ke luar wilayah ini.

337. Pada Juli 1979, Pat Walsh menyusun laporan mengenai krisis kemanusiaan di Timor-Leste untuk Action for World Development, sebuah LSM berbasis gereja di Australia. Ia memberi kesaksian pada Komisi bahwa laporan tersebut menyimpulkan bahwa di masa ini:

Upaya bantuan kemanusiaan Indonesia adalah prioritas yang jauh lebih rendah ketimbang operasi militer dan lembaga-lembaga independen tidak akan diizinkan masuk sampai Indonesia telah mencapai tujuannya.⁴⁵³

338. Walaupun berbagai LSM Australia mencoba untuk menginternasionalisasikan krisis kemanusiaan di Timor-Leste, pemerintah Australia memandang periode ini sebagai permulaan pengakuan *de jure*-nya bagi kedaulatan Indonesia atas wilayah ini. Posisi ini bertentangan dengan sebagian besar negara anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa.* Sementara itu, warga Timor-Leste di luar wilayah tersebut juga

.....
* Pemerintah Australia menjadikan 14 Februari 1979 sebagai tanggal Australia memulai proses pemberian pengakuan *de jure* kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste. Hari ini menandai dimulainya negosiasi antara Australia dan Indonesia mengenai cadangan minyak Laut Timor.[Lihat Bab 7.1: Hak penentuan nasib sendiri].

mencoba untuk meningkatkan kesadaran internasional akan krisis kemanusiaan tersebut. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, submisi diajukan kepada Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi di New York, dan resolusi-resolusi Sidang Umum PBB pada masa itu mulai mengacu pada kelaparan dan berbagai kebutuhan kemanusiaan orang Timor-Leste. Hal ini memperkuat usaha yang dilakukan José Ramos-Horta dan rekan-rekannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁴⁵⁴

339. Pemerintahan sipil Indonesia dan Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi satu-satunya lembaga yang memberi bantuan sampai 1979. Dengan sumberdaya yang kurang, dan ditambah dengan kontrol ketat militer Indonesia terhadap operasinya, bermacam lembaga ini tidak mampu memenuhi kebutuhan mendesak penduduk. Obat-obatan jarang tersedia; dan bantuan yang disalurkan melalui PMI sering masuk ke pasar gelap, di luar kemampuan orang Timor-Leste untuk membelinya.⁴⁵⁵

340. Setelah berbagai laporan mengenai bencana kemanusiaan dipublikasikan, pada September 1978 sebelas duta besar negara asing dan beberapa wartawan mengunjungi Timor-Leste didampingi oleh Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja.* Mereka mewakili pemerintah Kanada, AS, Australia, Jepang, Selandia Baru, India, Korea Selatan, Bangladesh, Mesir, Suriah, dan Irak. Mereka diberi tahu bahwa sekitar 125.000 orang telah turun dari gunung, 20.000 - 30.000 dari mereka berada dalam kondisi yang amat mengenaskan. Empat duta besar (dari Australia, Kanada, Jepang, dan AS) menyerukan untuk segera dilakukan operasi bantuan kemanusiaan internasional.⁴⁵⁶ Walaupun dalam keadaan mendesak seperti itu, satu tahun berlalu sebelum ICRC dan LSM Amerika Catholic Relief Services (CRS) tiba di Timor-Leste untuk menyediakan bantuan darurat. Hal ini terjadi setelah ABRI merampungkan Operasi Seroja, seperti yang disebut di atas.

Bantuan ICRC dan CRS

341. LSM Amerika Serikat Catholic Relief Services (CRS) menjalankan misi survei awalnya pada Mei 1979. Komisi menerima submisi dari CRS, termasuk berbagai dokumen dari masa itu, yang memberi banyak informasi mengenai skala krisis tersebut dan kurangnya sumberdaya untuk menanggulangnya. Pada Oktober 1979, CRS dan ICRC memulai operasi bantuan darurat. Salah satu yang terlibat adalah Gilman dos Santos, yang meninggalkan posisinya sebagai pegawai negeri pada 1979 dan bergabung dengan tim darurat CRS. Ia bersaksi di hadapan Komisi bahwa kantornya bekerja 18 -20 jam sehari, tujuh hari per minggu. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa sementara banyak orang dalam pemerintahan sipil Indonesia yang membantu kerja darurat CRS dan ICRC, pihak militer dan polisi Indonesia bersikap tidak mendukung dan menciptakan banyak halangan bagi pekerja bantuan.⁴⁵⁷

* Sejumlah organisasi kemanusiaan melaporkan situasi ini; termasuk Australia Council for Overseas Aid (ACFOA), perwakilan World Vision Indonesia, dan Palang Merah Indonesia. Lihat kesaksian Pat Walsh kepada CAVR dalam audiensi publik nasional tentang Kelaparan dan Pemindahan Paksa, 28 - 29 Juli 2003.

342. Jelas bahwa Indonesia tidak menggunakan sumberdayanya secara memadai untuk mencegah atau menanggapi kelaparan. CRS pernah dua kali kekurangan pasokan dan terpaksa meminjam beras kepada Bulog (Badan Urusan Logistik), badan penyalur beras pemerintah Indonesia, yang menyimpan stok berlebih di Dili pada masa ketika sejumlah besar penduduk menderita kelaparan dan penyakit yang berkaitan dengan kelaparan di dalam kamp-kamp yang dikuasai militer.⁴⁵⁸

343. Komisi mendengarkan kesaksian dari Pat Walsh bahwa CRS dan ICRC bekerja keras dan efisien. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa selama 18 bulan berikutnya, ICRC bersama Palang Merah Indonesia (PMI) membantu 80.000 pengungsi di 15 desa dan menyelamatkan banyak nyawa. Walsh mengatakan bahwa selama periode ini, CRS menghabiskan USD4 juta, mendistribusikan 17.000 ton pangan serta obat-obatan, pakaian, sabun, benih, peralatan pertanian, dan kerbau.⁴⁵⁹ Mengingat skala krisis, dan dibandingkan dengan jumlah lembaga bantuan internasional dan tingkat bantuan yang diberikan dalam krisis di Timor-Leste pada akhir 1999, paket bantuan ini relatif kecil dan penyampaiannya yang tertunda terbukti sangat terlambat bagi banyak orang. Kontrol militer Indonesia atas pendistribusian bantuan adalah hambatan utama usaha pemberian bantuan. Sementara Komisi menerima banyak kesaksian mengenai pentingnya bantuan yang terbatas ini, baik CRS maupun ICRC tidak membahas persoalan dasar konflik internasional tersebut yang menjadi penyebab bencana kelaparan tersebut.

Ataúro sebagai pulau penjara

344. Ataúro memiliki sejarah digunakan sebagai pulau penjara oleh rezim yang silih berganti di Timor-Leste. Pemerintahan Kolonial Portugis sudah lama menggunakannya, seperti halnya pasukan pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Rezim pendudukan Indonesia memulai kebijakan serupa pada 1980. Komisi menerima kesaksian ahli bahwa ini merupakan kepanjangan dari kebijakan memisahkan penduduk sipil yang dianggap dapat menjadi basis dukungan di masa mendatang bagi Resistansi bersenjata. Gilman dos Santos memberikan kesaksian:

Pada tahun 1980, ABRI dan pemerintah setempat kembali memindahkan secara paksa ke Pulau Ataúro orang-orang yang dicurigai memiliki keluarga yang menjadi pejuang kemerdekaan yang berada di hutan-hutan.⁴⁶⁰

345. Para korban selamat juga bersaksi kepada Komisi bahwa kebijakan ini dijalankan bersama oleh militer dan pemerintahan sipil.⁴⁶¹

346. Sebagian orang pertama yang dikirim ke Ataúro adalah mereka yang ikut dalam pemberontakan (*levantamentos*) selama masa ini. Para tersangka pendukung serangan 10 Juni 1980 atas stasiun TV di Dili dibawa ke Ataúro setelah ditahan dan disiksa di Dili.⁴⁶² Orang yang datang belakangan termasuk sejumlah keluarga pejuang Resistansi, yang banyak datang dari berbagai distrik setelah operasi 'pagar betis' 1981.⁴⁶³ Komisi mendengarkan kesaksian warga Mau Chiga di pegunungan tengah, yang diasingkan di Ataúro pada Agustus 1982, setelah percobaan pemberontakan.⁴⁶⁴

347. Komisi mendengarkan kesaksian ahli dari Ceu Lopes Federer, seorang pekerja kemanusiaan Timor bersama ICRC di Ataúro antara 1980 - 1982. Ia menceritakan kepada Komisi bahwa kapal yang datang dengan tahanan di Ataúro pada umumnya adalah perempuan, anak-anak, dan orang tua. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa banyak yang diperdaya sampai percaya bahwa mereka hanya akan dibawa dari rumahnya selama satu atau dua hari, dan bahwa mereka datang hampir dengan tangan hampa.⁴⁶⁵

348. Tingkat kematian sangat tinggi. Ceu Lopes Federer mengingat kembali terjadinya wabah epidemi kolera akibat kondisi kamp-kamp yang mengenaskan, dan tingkat kematian yang tinggi di antara anak-anak.⁴⁶⁶ Walaupun pengamanan di Ataúro lebih longgar dibandingkan di daratan utama, pulau ini dikenal memiliki sumber makanan dan air yang terbatas, dan ribuan tahanan yang datang menghadapi berbagai kesulitan berat.

349. Laporan ICRC ketika itu membenarkan bahwa pemindahan penduduk ke Ataúro telah “menipiskan” sumber makanan di pulau tersebut, sehingga lembaga tersebut menerapkan program makanan darurat.⁴⁶⁷ Kesaksian kepada Komisi dari para korban selamat menceritakan mengenai pentingnya nilai bantuan ini dalam menyelamatkan nyawa.⁴⁶⁸ Perkiraan jumlah total populasi tahanan bervariasi, dan kemungkinan besar melampaui 4.000.⁴⁶⁹ Ceu Lopes Federer mengatakan kepada Komisi bahwa ia membuat daftar sampai 1982, ketika ia meninggalkan pulau tersebut, yang mencantumkan 6.400 nama orang yang pernah ditahan di Ataúro.⁴⁷⁰ Komisi juga diberi tahu bahwa militer Indonesia melakukan pelanggaran seksual terhadap banyak perempuan di pulau tersebut.⁴⁷¹

350. Pada pertengahan 1980-an para tahanan dipindahkan keluar pulau tersebut, walaupun dalam banyak kasus tampaknya mereka dipindahkan ke berbagai kamp di daratan utama yang disebut desa binaan, tempat mereka menjalani proses indoktrinasi ideologi Pancasila Indonesia, dan bukannya dikembalikan ke daerah asal mereka.⁴⁷²

Berbagai kamp penahanan ditutup

351. Pada 1982 - 1983 sebagian besar orang diizinkan untuk meninggalkan kamp penahanan. Beberapa orang kembali ke desa asal mereka, apabila memungkinkan. Yang lainnya mendirikan desa baru, yang sering diberikan nama desa aslinya, yang kini telah ditinggalkan. Yang lainnya bermukim di desa jenis baru, yang disebut desa pemukiman.⁴⁷³

352. Penduduk di ibukota Dili bertambah pesat pada awal dasawarsa 1980-an. Pada 1975, penduduknya kurang lebih 28.000 jiwa, Biro Statistik Indonesia menghitung jumlah penduduk di distrik Dili 67.039 jiwa pada 1980.⁴⁷⁴ Pola baru urbanisasi ini memungkinkan aparat militer Indonesia untuk memantau penduduk lebih mudah. Jaringan informan, Kartu Tanda Penduduk, dan kebebasan gerak yang terbatas serta penahanan sewenang-wenang menjadi ciri dari masyarakat yang dikontrol ketat ini.⁴⁷⁵

353. Selama periode ini, antara 1978 dan awal dasawarsa 1980-an, Militer Indonesia menjalankan program pemukiman yang secara radikal dan permanen mengubah pola pemukiman di Timor-Leste. Masyarakat Timor secara tradisional tinggal di dusun-dusun kecil yang terdiri atas beberapa rumah tempat beberapa keluarga inti tinggal, yang dalam bahasa Tetum disebut *knua*. Pola pemukiman terdahulu yang tersebar di pegunungan diubah dengan paksa menjadi penduduk yang pada umumnya tinggal di pesisir yang terkonsentrasi di berbagai kota sepanjang jalan utama. Tujuan strategis untuk memisahkan penduduk sipil dari pejuang Resistansi di gunung-gunung, dan menahan mereka di wilayah tempat mereka dapat dengan mudah dipantau, merupakan pergeseran fundamental dalam gaya hidup orang Timor. Walaupun suasana penahanan ini melonggar pada pertengahan dasawarsa 1980-an dengan diizinkan penduduk untuk meninggalkan kamp mereka, pola perubahan pemukiman dasar ini masih terasa sampai sekarang.

Operasi keamanan

Tinjauan

354. Dengan Timor-Leste dinyatakan takluk pada Maret 1979, Militer Indonesia memfokuskan diri pada operasi-operasi pembersihan yang lebih kecil dan pengawasan ketat terhadap penduduk di seluruh wilayah. Sisa-sisa Resistansi bersenjata ada di sejumlah kantong yang terisolasi.

355. Pada Juni 1980, satu dari sejumlah kelompok yang mampu bertahan ini melancarkan serangan ke ibukota Dili, yang mengejutkan ABRI, dan menunjukkan bahwa Resistansi masih aktif. Militer Indonesia menanggapi serangan ini dengan melakukan ratusan penahanan dan lebih daripada 100 pembunuhan. Banyak tahanan yang dipenjara pada masa ini dikirim ke Ataúro (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

356. Pada 1981, Militer Indonesia melancarkan serangan besar-besaran yang bertujuan menghancurkan sisa-sisa kelompok Resistansi. Serangan ini menggunakan taktik yang dikenal dengan sebutan 'kikis', atau 'pagar betis'. Sejumlah besar penduduk sipil, yang masih menderita akibat konflik di pegunungan dan penganiayaan di berbagai kamp tahanan ABRI, dipaksa bertugas untuk berjalan kaki melintasi wilayah itu dalam barisan seperti "pagar", untuk menjebak anggota Resistansi bersenjata yang masih tersisa. Perempuan, anak-anak, dan lelaki, termasuk orang tua, dipaksa ikut operasi ini. Kelaparan, sakit, dan perlakuan buruk oleh militer merupakan pengalaman lazim yang dirasakan penduduk sipil. Banyak yang mati. Tugas-paksa ini juga mengalihkan sejumlah besar penduduk sipil dari ladang mereka selama musim tanam, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kelaparan, terutama karena gangguan terhadap pertanian selama tahun-tahun operasi militer besar-besaran sebelumnya.

357. Secara militer, operasi ini gagal menghancurkan gerakan Resistansi bersenjata yang sering bisa lolos dari "pagar" itu. Lebih daripada 4.000 orang yang dianggap

sebagai “simpatisan Fretilin” ditahan dan dipenjarakan di Pulau Ataúro ataupun kamp pemukiman-kembali lainnya yang dikontrol ABRI.

Situasi di Dili dan di seluruh Timor-Leste, 1979 - 1980

358. Dengan tertangkap atau terbunuhnya para pemimpin utama gerakan Resistansi, Resistansi bersenjata dihancurkan dan mayoritas penduduk sipil Timor-Leste di pegunungan ditangkap dan menyerahkan diri di bawah kontrol mereka, militer Indonesia pada awal 1980 merasa yakin bahwa operasi militer besar di Timor-Leste telah selesai. Komando Pasukan Gabungan Operasi Seroja dibubarkan, dan Komando Operasi Militer pun dipindahkan dari Dili ke Bali, yang berarti bahwa Timor-Leste kini berada dalam struktur komando regional standar ABRI. Pada saat yang sama, kendali pemerintahan sipil secara resmi dialihkan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Secara militer, ABRI meneruskan berbagai operasi pembersihan untuk mengamankan kekuasaannya, namun secara umum, periode setelah penutupan Operasi Seroja secara komparatif cukup sepi dalam hal operasi militer.

359. Militer Indonesia terus mempertahankan peran dominan di dalam dan selama pengembangan pemerintahan sipil. Kehidupan bagi sebagian besar warga sipil pada masa itu penuh ketegangan dan ketakutan.⁴⁷⁶ Dalam sebuah submisi dari Asosiasi Eks-Tahanan Politik Timor-Leste (*Associação dos Ex-Prisoneiros e Detidos Políticos de Timor-Leste*, Assepol), Komisi mendengar bahwa sepanjang masa ini, dengan membengkaknya jumlah penduduk di Dili, para agen intelijen Indonesia terlihat di mana-mana. Assepol mengatakan kepada Komisi bahwa tidak ada proses peradilan di tahun-tahun akhir 1970-an dan awal 1980-an ini, dan militer memiliki kekuasaan yang tak terbatas untuk melakukan penangkapan dan penyiksaan sewenang-wenang.⁴⁷⁷ Banyak kesaksian individu kepada Komisi mendukung hal ini, dan menceritakan bahwa mereka diambil dari rumah mereka pada malam hari, atau dikumpulkan oleh militer untuk diinterogasi dan disiksa.⁴⁷⁸ Komisi telah membuat peta pusat penahanan dan interogasi di Dili dan Baucau selama tahun-tahun ini, banyak di antaranya tidak resmi, namun dioperasikan oleh militer Indonesia. Jumlah pusat penahanan dan interogasi ini jauh melebihi kebutuhan wajar sebuah negara demokratis yang dikelola berdasarkan aturan hukum (lihat Lampiran dari Laporan ini).

360. Di seluruh Timor-Leste, militer Indonesia mengembangkan struktur teritorialnya disertai dengan pemindahan penduduk dan berbagai perubahan demografis, sebagai akibat dari perpindahan besar pada periode itu. Di setiap desa di Timor-Leste, ABRI menempatkan seorang petugas Babinsa (bintara pembina desa), dan khususnya di sejumlah wilayah rawan, ada tim orang-orang seperti ini yang disebut Tim Pembina Desa (TPD). Pos-pos militer ini bekerja erat dengan Pertahanan Sipil (Hansip) yang beranggotakan orang-orang Timor, dan membantu militer Indonesia untuk mengontrol ketat segala lapisan masyarakat Timor-Leste. Dengan demikian di banyak wilayah negeri ini, orang-orang tinggal di beberapa desa pemukiman yang baru di bawah pengawasan ketat militer.

361. Situasi kelaparan akut yang terkait dengan sejumlah kampanye militer 1977 - 1978 dan berbagai kamp tahanan militer telah distabilkan oleh sejumlah upaya dari lembaga bantuan internasional, CRS dan ICRC. Namun, pada 1980, komunitas-komunitas belum mendapat peluang untuk pulih dari tahun-tahun traumatis akibat konflik ini. Peninggalan yang menyengsarakan itu mencakup kerentanan terhadap kelaparan dan sakit akibat penganiayaan selama konflik serta hilangnya tahun-tahun masa tanam dan panen yang normal.

Pemberontakan pertama: Dili, Juni 1980

362. Pada 10 Juni 1980, Falintil melancarkan serangan ke Dili, ke pemancar televisi baru di Marabia.⁴⁷⁹ Serangan ini benar-benar mengejutkan ABRI. Ini adalah pemberontakan (*levantamento*) besar pertama setelah kekalahan telak Fretilin pada akhir 1978. Nama *levantamento* (kebangkitan) digunakan oleh Gerakan Resistansi untuk memberi suatu rasa tujuan bersama bagi sesuatu yang sebenarnya merupakan serangan militer terbatas yang dilakukan oleh berbagai kelompok kecil Falintil yang masih bertahan, yang telah menyusun kekuatan kembali pada bulan-bulan sebelumnya. Serangan ke Dili membuktikan daya tahan Gerakan Resistansi serta perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan militer Indonesia. Serangan tersebut dilancarkan sampai Lahane dan Becora di pinggiran Dili. Salah seorang anggota pasukan penyerang mengatakan kepada Komisi bahwa tujuan dari serangan itu adalah “untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Fretilin masih ada.”⁴⁸⁰

363. Sebuah komunike kedutaan Amerika Serikat menyebutkan bahwa serangan itu mungkin akan menimbulkan tanggapan yang sangat keras:

Serangan pemberontak ke daerah pinggiran ibu kota provinsi ini telah mendatangkan kesulitan dan rasa malu bagi para pejabat keamanan, dan bisa diperkirakan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya serangan itu.⁴⁸¹

364. Pihak Militer Indonesia terkejut sekaligus dipermalukan dengan keberanian serangan dari pihak Resistansi yang dianggap sudah dikalahkan. Ratusan orang ditahan dalam pembersihan militer di ibukota. Komisi menerima informasi bahwa lebih daripada 100 orang terbunuh, dan bahwa penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya terhadap para tahanan umum terjadi (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Banyak tahanan diasingkan ke Ataúro.⁴⁸²

“Pagar Betis”: Operasi Kikis

365. Hampir setahun kemudian, pada pertengahan 1981, ABRI melancarkan operasi besar-besaran yang menggabungkan personil militer dengan puluhan ribu penduduk sipil yang membentuk “pagar betis” manusia. “Pagar” ini berjalan kaki melintasi daerah-daerah yang luas di wilayah itu untuk mencari dan menangkap pasukan Falintil yang tersisa, dengan tujuan utama menangkap ataupun membunuh Xanana Gusmão. Taktik ini disebut operasi kikis, berhasil digunakan untuk

memerangi berbagai pemberontakan di Indonesia, di mana penduduk setempat mendukung tujuan militer untuk menghancurkan pemberontakan. Taktik ini juga telah digunakan beberapa kali di Timor-Leste pada tahun-tahun sebelumnya.⁴⁸³ Namun di Timor-Leste, tidak seperti di Indonesia, militer kekurangan elemen yang sangat penting, yakni dukungan rakyat. Meski bisa menangkap banyak orang Timor, baik sipil maupun pejuang, pagar itu tidak berhasil secara substansial menghancurkan Falintil.

366. Sebelum operasi tersebut dijalankan, ICRC menghentikan kegiatannya di daratan utama Timor-Leste, dan CRS meninggalkan Timor-Leste pada November 1980 setelah menyelesaikan program daruratnya. Militer Indonesia pada dasarnya bebas menjalankan Kikis terlepas dari pengawasan internasional.

Mobilisasi massal penduduk sipil

367. Operasi 1981, yakni Kikis terbesar yang pernah dilakukan di Timor-Leste, diberi nama sandi Operasi Keamanan.⁴⁸⁴ Militer Indonesia melibatkan sekurangnya lima belas batalion teritorial, atau sekitar 12.000 prajurit, dari luar Timor-Leste dan pasukan tambahan yang tak diketahui jumlahnya untuk tugas tempur.⁴⁸⁵ Orang-orang Timor menyatakan bahwa lebih daripada 15 batalion pasukan terlibat.⁴⁸⁶ Operasi besar tampaknya terjadi di Sektor D,^{*} yakni wilayah Baucau, Lautém, dan Viqueque.⁴⁸⁷ Penduduk sipil direkrut paksa sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO). Secara resmi ABRI merekrut penduduk sipil lelaki berusia 12 - 35 tahun, namun kenyataannya, anak laki-laki yang jauh lebih muda dan pria dewasa yang jauh lebih tua, serta para perempuan, juga dilibatkan.⁴⁸⁸ Kelompok-kelompok orang ini ditempatkan di kesatuan militer tertentu untuk operasi ini. Jumlah total penduduk sipil yang dilibatkan sangat besar. Sebuah dokumen militer 1982 menyebutkan bahwa operasi ini menyertakan “60.000 penduduk sipil selain Wanra dan Ratih.”[†]
⁴⁸⁹ Sumber-sumber Marinir menunjukkan lebih banyak lagi yang dilibatkan, dengan menyebutkan adanya delapan batalion dan 120.000 milisi binaan yang bergerak dari timur ke barat, dan tujuh batalion dengan 25.000 milisi binaan yang bergerak dari barat ke timur, yang dimaksudkan untuk “menundukkan musuh di Aitana”.⁴⁹⁰

368. Pagar manusia ini mulai berjalan pada pertengahan 1981 dari Tutuala di titik paling timur Timor-Leste. Dari sini, kesatuan militer dan para TBO sipil berjalan ke barat menuju garis yang menghubungkan Com-Raca-Lospalos-Iliomar. Mereka membentuk pagar manusia yang membentuk barisan utara-selatan, dan menyapu medan untuk mencari Falintil. Tampak bahwa pagar ini berfungsi dalam dua hal, sebagai garis depan yang bergerak maju di depan pasukan ABRI dan menyapu untuk mencari Falintil, maupun sebagai tembok penjepit di mana kesatuan-

* Meski fokus dari operasi ini adalah di timur, namun di barat, militer Indonesia merekrut TBO untuk ikut serta dalam sebuah kampanye kecil kikis di kawasan antara Cassa dan Ainaro. Tidak ada catatan tentang penangkapan anggota Fretilin di sektor itu.

† Wanra (Perlawanan Rakyat) dan Ratih (Rakyat Terlatih) adalah dua dari empat tipe utama tenaga bantuan militer yang digunakan oleh ABRI. Dua lainnya adalah Hansip (Pertahanan Sipil) dan Kamra (Keamanan Rakyat). Lihat Bab 4: Rezim pendudukan.

kesatuan ABRI berusaha menggiring Falintil. Apapun tujuannya, taktik ini gagal menangkap kelompok Falintil dalam jumlah yang memadai untuk mengakhiri gerakan resistansi, dan banyak orang yang terlibat dalam pagar manusia itu tidak bertemu dengan Falintil samasekali. Namun, Komisi menerima kesaksian tentang para tawanan yang dieksekusi. Seorang TBO mengatakan kepada Komisi bahwa lima orang yang ditangkap oleh kesatuan militer tempat dia ditugaskan, dekat Cacavem di Iliomar, langsung dieksekusi.⁴⁹¹

369. Pada Juli 1981, satu pagar lainnya mulai berjalan dari koridor Venilale-Ossu-Viqueque dan bergerak ke arah timurlaut.⁴⁹² Kedua pagar ini bertemu di barisan pegunungan Matebian dengan maksud untuk mengepung Falintil dan menggiring mereka ke tempat yang lebih rendah. Sejauh itu, operasi ini belum berhasil melakukan penangkapan yang berarti. Setelah pengepungan Gunung Matebian, tahap akhir Operasi Kikis pun dimulai. Pasukan dan TBO kembali menyalir dari wilayah tengah ke pantai selatan, dan terus bergerak maju ke barat. Pagar ini bergerak mendekati daerah Lacluta, Viqueque; sementara dari timur, barisan lainnya bergerak maju untuk menemui mereka.

Pembantaian Lacluta

370. Ketika gerak maju itu mencapai daerah Lacluta pada September terjadi pembantaian yang, menurut sebagian besar kesaksian, membunuh ratusan orang. Tidak ada hitungan yang pasti. Monsignor Costa Lopes menyatakan bahwa 500 orang terbunuh.⁴⁹³ Pihak penguasa Indonesia mengakui ada 70 orang yang terbunuh.⁴⁹⁴ Sumber-sumber lain menyebutkan jumlah korban berada di antara dua angka itu.⁴⁹⁵ Komisi menerima bukti mengenai pembantaian massal terhadap orang-orang sipil, termasuk perempuan dan anak-anak pada saat ini. Komisi juga mendengar mengenai pembantaian yang kedua terhadap paling sedikit 20 orang.[†] Indonesia mengklaim sebuah kemenangan militer di daerah itu sepanjang masa ini, dengan menyebutkan bahwa 450 anggota Fretilin telah ditangkap dan 150 pucuk senjata disita, namun tidak menyebutkan tentang korban.⁴⁹⁶ Kebanyakan sumber lainnya mengatakan bahwa ini merupakan pembantaian penduduk sipil secara brutal.⁴⁹⁷ Pembantaian itu diyakini telah terjadi di dekat Batu Santo Antonio di lereng Gunung Aitana. Seorang pejuang Falintil mengingat kembali pembunuhan penduduk sipil di daerah itu oleh militer Indonesia:

Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri bagaimana militer Indonesia, Batalion 744, membunuh penduduk sipil di hadapan saya. Mereka menangkap orang-orang yang tak bersenjata itu, mengikat

.....
* Wawancara dengan José de Jesus dos Santos, Dili, 28 Juni 2004. Dia mengatakan bahwa kontak terjadi di antara 1 dan 10 September.

† Wawancara dengan Anacleto Ximenes, Cairui, Manatuto, 12 Maret 2004 dan dengan Sebastião de Cunha, Manatuto, 12 Mei 2004. Lihat juga Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa.

mereka kemudian menikam mereka sampai mati. Ada seorang perempuan hamil yang ditangkap dan dibunuh begitu saja, saya melihat kejadian itu dari jarak dekat, sekurangnya 100 meter dari tempat kejadian.⁴⁹⁸

Konsekuensi operasi

Hasil militer

371. “Pagar” ini jauh lebih berhasil dalam menangkap orang-orang yang masih bersembunyi di hutan dibandingkan menangkap pejuang Falintil, walaupun ada berbagai kesaksian tentang kesatuan Falintil yang dihancurkan.⁴⁹⁹ Untuk menjelaskan kegagalannya untuk menangkap banyak anggota Falintil, tampak dalam banyak kasus, pagar ini mungkin membiarkan Falintil untuk melintasi barisan itu. Komisi diberitahu tentang satu kejadian orang meloloskan diri dari “pagar” itu.

Saat kami lewat, banyak orang tahu, namun mereka melihat kami bukan seperti melihat manusia, tapi seperti melihat binatang yang melintasi pos mereka. Saya masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana saya melangkah di depan seorang musuh [orang Timor yang merupakan anggota pagar itu], namun mereka memandangi saya seolah saya ini seekor anjing, kemudian menyuruh saya pergi.⁵⁰⁰

372. Mungkin juga telah ada kerja sama antara Falintil dan para TBO asal Timor:

...saat kami sampai di [lokasi] pemancar Telkom [sekarang], ada banyak [anggota] Fretilin di sana. Tetapi karena telah ada kontak [dengan para TBO], Fretilin melewati saja pasukan [ABRI] Komandan Peleton Falo Chai.⁵⁰¹

373. Ada juga kemungkinan bagi Falintil untuk lolos dari barisan-barisan itu:

Kami berpecah menjadi kelompok-kelompok kecil, 3 sampai 4 orang, kemudian pada malam hari kami mencari cara untuk melintas di belakang mereka.⁵⁰²

Berbagai konsekuensi kemanusiaan

374. Operasi militer ini mengakibatkan berbagai konsekuensi kemanusiaan yang sangat berat di saat penduduk Timor belum pulih dari bencana kelaparan dan penderitaan yang traumatis akibat Operasi Seroja dan kondisi kamp tahanan. Sebelum militer memulai operasi ini, mereka mengharuskan kehadiran bantuan internasional, yang memang sudah terbatas, untuk meninggalkan wilayah ini.⁵⁰³ Ini saja merupakan berita buruk bagi sebuah masyarakat yang sangat rapuh

dan terisolasi. Pemaksaan terhadap penduduk sipil perdesaan dengan jumlah sedemikian besar untuk ikut dalam berbagai operasi militer pada paruh kedua 1981 telah memasukkan mereka ke dalam kondisi yang luarbiasa keras. Para TBO, banyak di antaranya anak-anak, dibawa ke daerah-daerah pertempuran, dan akibatnya, mereka sering menjadi korban.⁵⁰⁴ Penduduk sipil lainnya yang dipaksa ikut serta lebih banyak direkrut sebagai Ratih⁵⁰⁵ daripada Wanra, yang berarti bahwa mereka tidak dibayar, melainkan hanya menerima “penghargaan” tertentu atas keikutsertaan mereka. Mereka juga tidak diberi cukup makan. Banyak orang mati selama berjalan kaki melintasi wilayah yang berat.⁵⁰⁶

375. Operasi ini berlangsung selama musim tanam 1981, dan karena sejumlah besar petani subsisten dipaksa ikut serta, mereka tidak bisa menanam tanaman pangan mereka. Pada November 1981, Monsignor Lopes menulis surat ke Australia tentang akan datangnya bencana kelaparan, yang menimbulkan keprihatinan internasional.⁵⁰⁷ Pada Maret 1982, mantan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam mengunjungi Timor-Leste, dan bertemu dengan Monsignor Costa Lopes. Whitlam kemudian secara terbuka membantah klaim Monsignor Costa Lopes.⁵⁰⁸ Sebuah kunjungan oleh Dewan Gereja Dunia beberapa bulan berikutnya menemukan hal yang berbeda:

Jelas bahwa sejumlah besar orang telah dimukimkan kembali, dan masih ada banyak anak yang kurang makan. Ke mana pun kami pergi, orang-orang menyebutkan makanan dan tempat tinggal sebagai masalah utama mereka... kesan kami ialah bahwa banyak orang ingin kembali ke rumah tradisional dan tanah mereka di bukit-bukit.⁵⁰⁹

376. Indonesia mengklaim telah menangkap 4.500 “simpatisan Fretilin” selama operasi ini, dan telah mengirim 3.000 orang di antaranya ke Ataúro, dan 1.500 orang lainnya direlokasikan ke daerah-daerah lain.⁵¹⁰ Namun, Komisi menerima banyak kesaksian yang menyatakan bahwa mereka yang tertangkap adalah penduduk sipil dan bahwa sangat sedikit pejuang yang ditangkap dalam Operasi Kikis, dan bahwa sebagian besar dari mereka yang diasingkan ke Ataúro adalah perempuan, anak-anak, dan mereka yang lanjut usia.⁵¹¹

Membangun kembali resistansi

Tinjauan

377. Resistansi yang dipimpin oleh Fretilin nyaris dihancurkan oleh operasi pengepungan dan pembasmian 1978 - 1979. Sebagian besar pimpinan senior Fretilin dan Falintil terbunuh, tertangkap, atau menyerahkan diri dalam periode ini. Sisanya yang masih hidup, dalam kelompok terpisah, berupaya sekuat tenaga untuk menghimpun kekuatan kembali. Tiga anggota Komite Sentral yang masih bertahan dan melarikan diri ke wilayah timur, salah satunya adalah Xanana Gusmão. Sebagai pemimpin, Xanana Gusmão melaksanakan Konferensi Reorganisasi Nasional pada

Maret 1981 yang memulai proses perluasan Gerakan Resistansi menjadi front persatuan nasional yang lebih luas, dan mengubah arah taktis resistansi bersenjata menjadi perang gerilya. Pertemuan rahasia dengan pemimpin Gereja Katolik di Timor-Leste, Monsignor Costa Lopes, merupakan langkah penting ke arah tujuan persatuan nasional di antara para pihak yang bertentangan pada 1975, yakni UDT dan Fretilin.

378. Pada tahun-tahun awal perang dan pendudukan, Gereja merupakan penghubung satu-satunya dan vital ke dunia luar. Dalam tahun-tahun ini, Gereja telah mengalami transformasi dari benteng sistem kolonial Portugis menjadi suara bagi rakyat biasa Timor.

Sejumlah anggota Fretilin yang bertahan setelah serangan 1978 - 1979

379. Serangan militer Indonesia pada 1978 - 1979 menghancurkan strategi “perlawanan rakyat” Fretilin, di mana penduduk sipil dalam jumlah besar hidup dalam perlindungan ataupun kontrol Fretilin, menyediakan dukungan logistik bagi Falintil, dan dimobilisasikan secara politik untuk mendukung Resistansi. Keunggulan teknologi dan jumlah pasukan militer Indonesia sangat menguntungkan dalam sebuah perang yang berbasis posisi konvensional. Apalagi, dengan adanya puluhan ribu penduduk sipil di basis-basisnya, Fretilin terpaksa lebih sering menempuh strategi perlindungan daripada penyerangan terhadap ABRI. Periode perlawanan gabungan sipil-militer ini berakhir dengan jatuhnya *zonas libertadas* Fretilin pada 1978.

380. Penduduk yang selamat menyerahkan diri dan turun dari pegunungan, sengsara akibat operasi pengeboman dan pengepungan, dan umumnya berada dalam kondisi yang sangat buruk.⁵¹² Mereka berjumlah sampai 300.000 orang.⁵¹³ Militer Indonesia menyaring orang-orang yang menyerahkan diri dan memisahkan mereka yang diyakini sebagai kader Falintil atau Fretilin. Banyak yang hilang atau dieksekusi (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Penduduk sipil yang tersisa berada di bawah kontrol militer di sejumlah kamp sementara dan kemudian di berbagai kamp tahanan jangka panjang, sebagaimana diperinci di atas (lihat Bab 7.3.: Pemindahan paksa dan kelaparan).

381. Fretilin telah kehilangan sebagian besar pemimpin tingkat menengah dan seniornya. Falintil berada dalam situasi berantakan karena telah kehilangan sebagian besar personil, pemimpin, dan persenjataannya. Personil yang bertahan berada dalam situasi terisolasi dan tanpa sarana untuk berhubungan satu sama lain. Fase pertama Resistansi pun usai. Resistansi terorganisasi mampu bertahan karena dua sebab. Pertama, bertahannya beberapa pemimpin utama Fretilin yang mampu membangun kembali Resistansi. Kedua, bertahannya penduduk yang, meski secara fisik tidak lagi terpisah dari pasukan pendudukan Indonesia, pada akhirnya mampu membangun sebuah bentuk baru resistansi klandestin yang mendukung apa yang telah menjadi suatu perang gerilya klasik yang dijalankan oleh Falintil.

Kembali menyusun kekuatan

382. Menjelang jatuhnya Matebian, pada 22 November 1978, beberapa pemimpin politik dan komandan militer⁷ berhasil menerobos kepungan dan melarikan diri ke wilayah timur. Yang memimpin kelompok ini adalah Xanana Gusmão. Pada saat yang sama, sejumlah kesatuan Falintil yang lain dikirim ke barat untuk bergabung dengan Falintil di Sektor Timur-Tengah (*Centro Leste*). Sebagian besar dari kesatuan ini tak pernah bisa melewati barisan penjagaan Baucau-Viqueque yang dikontrol militer Indonesia, dan hanya satu kompi yang tiba di sektor Timur-Tengah.⁵¹⁴

383. Kelompok kecil yang melarikan diri dari Matebian menyusun kekuatan kembali di barisan pegunungan Legumau sebelah timur Baguia, yang berada di luar jangkauan ABRI. Mereka mencoba strategi baru perlawanan bawah tanah, menanggalkan tampilan militer mereka, berpakaian seperti penduduk sipil, dan menyembunyikan senjata mereka.⁵¹⁵ Tujuan mereka adalah mencari dan menghubungi para anggota Komite Sentral, Falintil, serta penduduk sipil yang selamat, dan untuk menilai perkembangan situasi. Xanana Gusmão mengenang tindakannya setelah meloloskan diri dari Matebian:

Kami langsung pergi [ke timur]. Begitu tiba di sana, kami mulai menyusun strategi, dan masing-masing dari kami mempelajari apa itu [perang] gerilya. Karena saya sebelumnya telah menjalin kontak dengan kelompok bawahanah [dari] saat [kami dulu berada di] basis perlawanan [bases de apoio], maka saya langsung pergi ke Mehara pada tanggal 7 Desember... Kami mencari [anggota resistansi]. Dari Dili, mereka [anggota klandestin] mengatakan kepada kami bahwa ada sejumlah kecil pasukan [Falintil], tapi mereka tidak bisa menghubungi pasukan itu, banyak dari mereka telah menyerahkan diri. Saya mengirim dua kelompok ke Centro [kawasan tengah] untuk mencari, [tapi] mereka mengatakan bahwa mereka tidak menemukan pasukan, tidak bertemu dengan penduduk sipil seorang pun di sana.⁵¹⁶

384. Ketiga anggota Komite Sentral Fretilin yang selamat di timur, yakni Xanana Gusmão, Txay, dan Mauhunu, mendiskusikan kebutuhan untuk menyusun kekuatan kembali dan mengembangkan strategi perlawanan baru pada awal 1979. Beberapa regu pencarian berangkat menuju kawasan tengah dan barat untuk berupaya menghubungi para anggota lain yang selamat, khususnya para pemimpin senior dari Komite Sentral Fretilin.⁵¹⁷ Ini tugas yang sulit dan berbahaya. Sebagian regu pencarian diserang, sebagian lainnya lenyap samasekali. Kelompok yang dipimpin oleh Xanana Gusmão diserang oleh ABRI di dekat Remexio pada Maret, tetapi sebagian kecil anggotanya bisa lolos dan kembali ke Mehara di timur. Pada bulan yang sama, tiga kompi Falintil dihabisi oleh tentara Indonesia di dekat Lore, distrik Lautém.⁵¹⁸ Gusmão menceritakan pencarian ini:

* Kelompok kecil ini mencakup José Alexandre Gusmão, Mau Hodu, Taur Matan Ruak, dan Nino Konis Santana.

Kami tidak tahu siapa [dari Komite Sentral Fretilin] yang masih hidup. Kami mencari di tempat-tempat lain, [tapi] kami tidak bisa memutuskan, kami tahu bahwa beberapa orang sudah mati... Anggota kelompok Klandestina mencari anggota-anggota Komite Sentral yang selamat di hutan-hutan dari Centro sampai Fronteira....Pada tahun 1980 kami menyeberangi jalan Baucau-Viqueque untuk mencari, mengumpulkan informasi, mendatangi desa-desa, bertanya kepada orang-orang di sepanjang jalan menuju perbatasan [Fronteira]... dari Henrique Belmiro dan kawan-kawan, kami mengetahui bahwa sudah tidak ada lagi [anggota Komite Sentral].⁵¹⁹

385. Kendati demikian, upaya pencarian itu mencapai keberhasilan. Mereka menemukan beberapa kantong kecil Resistansi dan pasukan Falintil yang selamat. Ada beberapa kelompok kecil di Laline dan Uaimori, kelompok David Alex di Matebian, beberapa lagi di Manatuto, serta yang lainnya.⁵²⁰ Dalam upaya pencarian lainnya pada Mei 1980, Xanana Gusmão menghubungi para anggota Resistansi di kawasan tengah, yakni Same dan Ainaro, dan menemukan para anggota yang selamat di dekat Dili.⁵²¹ Di kawasan barat mereka hanya menemukan satu kelompok.⁵²² Selain mencari lokasi anggota Resistansi yang selamat, para gerilyawan juga menghubungi penduduk sipil untuk membentuk kelompok-kelompok klandestin di dalam wilayah yang dikontrol militer Indonesia.

386. Komisi mendengarkan kesaksian dari Francisco Guterres (Lu Olo), yang pada akhir dasawarsa 1970-an merupakan seorang kader Fretilin di pegunungan. Dia menceritakan tentang kelegaan yang dia rasakan ketika Xanana Gusmão tiba di kampnya:

Ketika kami mendengar bahwa kakak kami, Xanana Gusmão, telah datang, hati kami merasa tenang... ketika dia kembali, kami semua berlari ke arahnya dan memeluknya... kemudian kami mendengar bahwa Mauhunu masih hidup, dan di Lospalos seorang ajudante anggota Komite Sentral juga masih hidup. Hanya tiga orang ini yang masih hidup.

Bagaimana kami bisa melanjutkan perang ini? Kakak kami, Xanana, seperti sang arsitek atau pembangun. Dia berkata “Kita bisa membuat sebuah perahu, dan kita semua bisa mengangkat perahu ini, lalu mendayungnya maju. Walau ini akan sulit, kita bisa melakukannya.” Kami semua sepakat dengan kakak kami... kami sangat percaya padanya...⁵²³

Konferensi Reorganisasi Nasional pada Maret 1981

387. Gerakan Resistansi yang bertahan kehilangan kepemimpinan, koordinasi, dan struktur.⁵²⁴ Karena gagal menemukan para anggota Komite Sentral lainnya yang selamat, dan dengan tertangkapnya Txay, Sera Key, dan Solan oleh ABRI, maka pada 1980 Xanana Gusmão memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinan dan mengorganisasi pertemuan nasional Fretilin:

Maka saya memutuskan [ini] pada bulan September...karena saya tahu bahwa semua anggota Komite Sentral telah mati...tidak ada yang lebih senior dari saya, kecuali Mau Hunu. Tapi saya mengenalnya, jadi saya memutuskan untuk mengambil alih agar kami bisa melakukan reorganisasi.⁵²⁴

388. Xanana Gusmão bermaksud mengonsolidasi dan merestrukturisasi Resistansi sebagai sebuah perang gerilya, yang didasarkan atas berbagai pelajaran dari pengalaman maupun teori:

Sejak 1979 kami berusaha mempelajari perang gerilya dan bagaimana menerapkannya di Timor. Kami belajar di dalam hutan, [kami] belajar tentang perang di Vietnam, perang di Kuba, macam apapun dari [perang] gerilya, kami pikir perang-perang itu tidak akan cocok karena kondisi-kondisinya berbeda. Itulah sebabnya mengapa pada 1979, kami menghabiskan waktu satu tahun untuk mempelajari bagaimana perang gerilya [seharusnya dilakukan]. Dari sini kami melakukan reorganisasi, apa yang bisa kami lakukan dengan [kelompok-kelompok] gerilya kecil, merencanakan aktivitas politik, aktivitas militer, dan bagaimana keduanya saling berhubungan.⁵²⁵

389. Berdasarkan berbagai kontak sepanjang 1979 - 1980, Gerakan Resistansi menyelenggarakan “Konferensi Reorganisasi Nasional” pada Maret 1981 di Maubai, Lacluta.⁵²⁶ Struktur serta kepemimpinan politik dan militer Gerakan Resistansi direorganisasi, dan Dewan Revolusioner Resistansi Nasional (CRRN, Conselho Revolucionária da Resistência Nacional) pun dibentuk untuk mengendalikan keseluruhan Gerakan Resistansi ini.⁵²⁷ CRRN dimaksudkan untuk menjadi sebuah forum payung bagi semua elemen prokemerdekaan, bukan hanya Fretilin, dan merupakan langkah signifikan untuk menjauh dari kebijakan garis keras 1977 ketika Fretilin dinyatakan sebagai partai Marxis-Leninis (*Partido Marxista-Leninista Fretilin*, PMLF), serta menuju persatuan nasional.⁵²⁸

390. Xanana Gusmão dipilih untuk menempati semua posisi pemimpin—Komisaris Politik Nasional PMLF, Panglima Besar Falintil, dan Presiden CRRN.⁵²⁹ Sebuah

* Sebagai contoh, serangan Falintil ke pemancar televisi Marabia pada Juni 1980, yang diuraikan di butir 362 di atas (paragraf 362), dilakukan oleh sebuah kelompok dari kawasan Utara-Tengah secara lepas dari kelompok yang selamat yang berbasis di timur.

Komite Sentral baru pun dibentuk,* yang terdiri atas para pemimpin baik yang ada di Timor-Leste maupun yang di luar negeri.⁵³⁰ Struktur Falintil dirumuskan kembali, dan para pemimpin baru diangkat.⁵³¹ Sebuah strategi perang gerilya pun diputuskan secara resmi, di mana beberapa ratus pasukan Falintil yang selamat akan menyebar ke seluruh pelosok negeri ini.⁵³² Karena telah dikalahkan sebagai sebuah kekuatan militer konvensional, Falintil akan bergerak dalam berbagai kelompok gerilyawan kecil yang berpindah-pindah dan tidak lagi berupaya untuk memusatkan kekuatannya dalam menghadapi militer Indonesia. Para gerilyawan akan didukung oleh sebuah struktur klandestin di daerah perkotaan. Idenya ialah bahwa sebuah struktur klandestin di bawah CRRN akan beroperasi melalui pusat-pusat Resistansi nasional di tingkat distrik (*cernak*) dan sel-sel kecil di tingkat desa yang terdiri atas empat sampai tujuh orang (*nurep*). Untuk mengatur Gerakan Resistansi baru tersebut negeri ini dibagi menjadi tiga kawasan—kawasan timur, Funu Sei Nafatin (“perjuangan masih berlanjut”); kawasan tengah, Nakroma (“cahaya”); dan kawasan perbatasan, Haksolok (“kesenangan”).⁵³³

Pertumbuhan Resistansi

391. Setelah reorganisasi politik dan militer, kapasitas Gerakan Resistansi perlahan-lahan tumbuh. Struktur klandestin dimaksudkan untuk mendukung para gerilyawan dan membangun jaringan dengan berbagai kelompok lain, termasuk dengan mereka yang punya hubungan erat dengan pihak Indonesia. Sebuah jaringan klandestin yang berbasis sel mulai dikembangkan, termasuk di dalam Dili. Dalam upaya untuk mengontrol jaringan klandestin ini, militer Indonesia mengembangkan berbagai jaringan intelijennya sendiri yang luas sampai ke tingkat desa. Di semua desa ada kehadiran militer. Sebagian desa memiliki babinsa (bintara pembina desa), sedangkan sejumlah desa lainnya memiliki TPD, “tim pembina desa”, bergantung pada seberapa bergolaknya sebuah desa atau daerah.⁵³⁴ Dokumen militer Indonesia dari 1983 menunjukkan adanya pengawasan luas terhadap penduduk dengan tujuan untuk “melindungi” masyarakat dari pengaruh propaganda “GPK” (gerilyawan):

Menunjuk orang-orang terpercaya seperti *katuas* (para tetua) untuk membantu para ketua RT... Setiap *katuas* harus bisa mengetahui secara pasti aktivitas keluarga-keluarga yang berada di bawah binaannya; misalnya, saat mereka pergi ke ladang, pergi untuk mengumpulkan kayu, meminta izin untuk pergi ke desa lain, mengembalakan ternak, pergi ke pasar, dan seterusnya.

Menunjuk seorang “informan” di masing-masing kelompok yang terdiri atas 10 - 15 keluarga ini, yang dipimpin oleh seorang *katuas*. Informan ini harus bisa mengikuti, secara diam-diam, semua aktivitas kesepuluh sampai lima belas keluarga ini.⁵³⁵

* Anggota-anggota Komite Sentral yang diangkat di Timor-Leste adalah Xanana Gusmão (Comissario Política Nacional), Mauhunu, Mau - Hodu, Bere Malae Laka, Kilik Wae Gae (Reinaldo Correia), Nelo (Dinis Carvalho), Sakinere, Holy Natxa, Lere Anan Timor (Tito da Costa), Harin, dan Mauk Moruk (Paulino Gama). Anggota-anggota yang diangkat di luar negeri adalah Abílio Araújo (Sekretaris Umum), Mâri Alkatiri, Roque Rodrigues, José Luís Guterres, Guilhermina Araújo, José Ramos-Horta, dan Rogério Lobato.

392. Komisi mendengarkan kesaksian tentang berbagai konsekuensi bila dicurigai sebagai seorang anggota aktif Gerakan Klandestin Resistansi, yakni terus-menerus terancam penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan. Di Distrik Ainaro, sejumlah tebing karang di Builico dikenal oleh militer Indonesia sebagai Jakarta II. Bila penduduk Ainaro hilang setelah ditahan, pihak militer pun menjelaskan kepada para keluarga dan komunitasnya bahwa mereka telah dibawa ke Jakarta, padahal kenyataannya mereka telah dibawa ke tebing curam di Builico, dan dilemparkan dari tebing karang ini. Tidak diketahui berapa jumlah orang yang telah dilemparkan sampai mati antara 1981 - 1983.⁵³⁶

393. Kehadiran militer sampai ke tingkat desa ini, yang disertai dengan pengawasan yang ketat, sering mengakibatkan berbagai ketegangan yang mendorong terjadinya kekerasan. Pembelotan beberapa ratus anggota kesatuan pembantu ABRI asal Timor ke Falintil di Viqueque pada 1983 merupakan contoh yang mencolok.⁵³⁷ Pembelotan ini merupakan bagian dari pola pemberontakan lebih besar oleh Gerakan Resistansi yang terjadi pada 1982 sampai 1983. Efektivitas matarantai antara jaringan klandestin dan gerilyawan ditunjukkan oleh berbagai dokumen militer dari 1982 yang menunjukkan fokus militer untuk menghancurkan struktur klandestin.⁵³⁸ Tanda paling jelas tentang regenerasi Fretilin dan kegagalan ABRI untuk menghancurkan Falintil adalah adanya gencatan senjata yang disepakati dengan ABRI pada Mei 1983 (lihat bagian 3.16: Gencatan senjata 1983 dan masa sesudahnya, paragraf 411 - 413, di bawah).

Resistansi di bawah pimpinan Xanana Gusmão: Menuju persatuan nasional

394. Sejak invasi 1975, Fretilin telah mendefinisikan diri sebagai pengejawantahan Resistansi. Ini mulai berubah beberapa tahun sesudah reorganisasi 1981. Pada September 1982, Xanana Gusmão dan Monsignor Martinho da Costa Lopes bertemu secara rahasia di Desa Mehara, Distrik Lautém.⁵³⁹ Pada pertemuan ini, Monsignor Costa Lopes menyoroti perlunya persatuan nasional antara Fretilin dan UDT. Pertemuan ini, dan seruan untuk persatuan politik, penting terutama karena selama konflik internal 1975, UDT telah mengklaim bahwa mereka membela prinsip Gereja Katolik dalam menghadapi ancaman komunis.⁵⁴⁰ Kenyataan bahwa pemimpin Gereja Katolik di Timor-Leste bertemu dengan pemimpin Fretilin sekaligus pemimpin Gerakan Resistansi adalah sinyal jelas bahwa Gereja tidak memandang Fretilin sebagai komunis, dan seruan Monsignor Costa Lopes untuk persatuan nasional menunjukkan pemahamannya tentang Gerakan Resistansi lebih sebagai perjuangan nasionalis ketimbang perjuangan kiri ideologis.

395. Pada 1983, Komite Sentral Fretilin mendeklarasikan persatuan nasional sebagai garis politik resminya.⁵⁴¹ Ini jelas mengacu kepada permusuhan antara UDT-Fretilin. Untuk bisa meningkatkan kemungkinan kerjasama multipartai, Fretilin mengubah beberapa kebijakannya terdahulu yang radikal. Sebagai contoh, pada 1983 Fretilin berpartisipasi dalam sebuah gencatan senjata dan beberapa negosiasi dengan militer Indonesia. Hal ini sebelumnya tidak dibenarkan berdasarkan kebijakannya yang

tegas: “negosiasi—tidak dan tak akan pernah.”⁵⁴² Pada 1984, Fretilin menanggalkan ideologi Marxis-Leninis yang telah dideklarasikan pada 1977 dan disertakan ke dalam nama partai itu pada 1981. Dengan tindakan ini, Fretilin mencabut basis sosial-revolusioner dari sikapnya terdahulu demi mendukung platform nasionalis yang lebih terbuka.

396. Proses perubahan yang ditempuh oleh Fretilin ini bukan tanpa tentangan. Orang-orang garis keras partai seperti Kilik Wae Gae (Kepala Staf Falintil) dan Mauk Moruk (Komandan Brigade Merah) memandang perubahan politik ke arah sikap yang lebih moderat ini sebagai kompromi yang tak bisa diterima.⁵⁴³ Sebuah percobaan kudeta oleh faksi ini gagal, dan akhirnya oposisi terhadap berbagai kebijakan baru ini pun pudar.⁵⁴⁴ Arah baru di bawah payung CRRN ini memperluas platform politik Resistansi dan akhirnya menciptakan oposisi dengan basis yang lebih luas terhadap pendudukan Indonesia.

Gereja Katolik

397. Gereja Katolik, di bawah kepemimpinan berani Monsignor Martinho da Costa Lopes, telah memainkan peran sangat penting di dalam negeri Timor-Leste selama tahun-tahun awal pendudukan. Dari yang sebelumnya merupakan pembantu pemerintahan kolonial Portugis yang ultrakonservatif, komposisi Gereja kemudian berubah selama era Indonesia. Dengan perginya banyak pastor dan suster Portugis setelah invasi dan pendudukan Indonesia, komposisi Gereja menjadi lebih “ter-Timorisasi-kan”. Selain para pastor asal Timor, ada juga para pastor asal Indonesia maupun internasional. Ketiga kelompok ini memainkan peran yang berbeda. Banyak pastor asal Indonesia cenderung mendukung pemerintah Indonesia, sedangkan pastor internasional, yang harus memperoleh persetujuan visa dari pemerintah Indonesia, mengambil sikap tidak terlibat politik secara lebih terbuka.⁵⁴⁵ Yang paling signifikan, banyak pastor asal Timor termobilisasi sebagai akibat dari penderitaan sangat besar yang mereka saksikan pada tahun-tahun awal ini.⁷

398. Anggota-anggota Gereja di Timor-Leste sering kali bertentangan dengan Vatikan, yang tidak mendorong para pastornya untuk terlibat dalam persoalan-persoalan seperti hak-hak asasi manusia ataupun politik Resistansi. Sekalipun demikian, karena kebijakan resmi Vatikan tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste, Gereja Katolik di wilayah ini tetap langsung di bawah pengawasan Vatikan, bukan termasuk bagian dari gereja Indonesia. Jaringan Katolik internasional menyediakan satu-satunya penghubung antara Timor dan dunia luar pada tahun-tahun ketika wilayah ini benar-benar tertutup. Para suster dan pastor menulis surat ke luar negeri di masa ketika hampir tidak ada media internasional yang mengamati berbagai kejadian di dalam wilayah ini, dan ketika, lepas dari adanya kehadiran ICRC yang hanya kadang-kadang, tidak ada organisasi internasional lain yang

* Beberapa jajaran kepastoran asal Timor mendukung—dan digunakan oleh—rezim Indonesia, ditugaskan untuk posisi-posisi kewenangan di pemerintahan provinsi. Lihat Smythe, *The Heaviest Blow*, hal. 37.

diperbolehkan masuk ke wilayah ini. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi bahwa selama 1975 – 1979, sumber-sumber Gereja memainkan peran satu-satunya dan yang sangat penting dalam menyampaikan informasi tentang kondisi di Timor-Leste kepada dunia luar.⁵⁴⁶

399. Pada 1983, Gereja membuat keputusan yang terbukti vital bagi keberlangsungan budaya masyarakat Timor. Gereja di Timor-Leste memutuskan bahwa bahasa resmi peribadatan adalah bahasa Tetum. Akibatnya, Keuskupan Dili memohon izin Vatikan untuk menggunakan Tetum sebagai bahasa Misa. Vatikan setuju, dan ini dilaksanakan selama masa jabatan Uskup Belo.⁵⁴⁷ Hal ini meningkatkan identitas Timor di Gereja Katolik, dan menambah rasa perlindungan yang ditawarkan bagi masyarakat biasa di masa-masa yang sangat sulit.

400. Rasa perlindungan yang ditawarkan oleh Gereja adalah faktor utama penduduk dalam jumlah besar beralih memeluk agama Katolik selama masa pendudukan. Pada 1973, sekitar 28% dari jumlah penduduk menyatakan diri Katolik.⁵⁴⁸ Menjelang 1980, Biro Statistik Indonesia mencatat sebanyak 80% dari jumlah penduduk wilayah ini memeluk agama Katolik.⁵⁴⁹ Ideologi negara Indonesia yang mengharuskan warga negaranya memeluk satu dari lima agama resmi kemungkinan memengaruhi penyebaran ajaran Katolik ini.

401. Sikap blak-blakan Monsignor Costa Lopes membawa pada pengunduran dirinya secara paksa pada 1983. Setahun kemudian, dia berpidato di depan Komite Keuskupan Amerika Serikat untuk Pembangunan Sosial dan Perdamaian Dunia, mengundang perhatian tentang peran Gereja yang sangat penting sebagai pelindung masyarakat Timor-Leste:

Di tengah genosida kultural dan psikologis yang ditimpakan oleh tentara Indonesia kepada kami, Gereja Katolik telah muncul sebagai satu-satunya organisasi yang dipercaya oleh masyarakat Timor-Leste... Apapun yang masyarakat ketahui, mereka beritahukan kepada para pastor. Gereja Timor-Leste telah mendengarkan dengan seksama selama hampir sembilan tahun sejak invasi Indonesia. Dengan kewenangan tertinggi, Gereja Timor-Leste bisa mengatakan bahwa ia mengetahui kesengsaraan maupun aspirasi terdalam rakyat Timor.⁵⁵⁰

Gencatan senjata 1983 dan masa sesudahnya

Tinjauan

402. Pada 1982, Indonesia melaksanakan pemilihan umum (pemilu) nasionalnya di Timor-Leste untuk pertama kalinya. Dengan selesainya Operasi Keamanan, sekali lagi militer Indonesia menilai bahwa wilayah ini sudah tenang. Di Timor-Leste, mayoritas besar, yakni 99% pemilih, dilaporkan telah memilih Golkar, alat politik Presiden Soeharto. Pemilu ini disusul dengan perubahan drastis dalam personil sipil dan militer di jajaran pemerintahan Indonesia.

Mantan anggota senior UDT, Mario Carrascalão, diangkat sebagai gubernur, dan Kolonel Purwanto mengambil alih sebagai pimpinan militer di wilayah ini. Menghadapi gerakan klandestin yang sedang bangkit mendukung Falintil yang baru berhimpun kembali, Militer Indonesia mencari jalur berbeda untuk mengatasi Resistansi: negosiasi. Panglima Falintil, Xanana Gusmão, mengadakan pembicaraan dengan Kolonel Purwanto, dan untuk sementara waktu yang singkat, sebuah gencatan senjata sementara pun berlaku.

403. Namun, begitu dilantik sebagai Presiden, Soeharto segera mengangkat Jenderal Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI. Jenderal Moerdani adalah salah seorang arsitek pengambilalihan Timor-Leste oleh militer Indonesia, dan dia tidak punya banyak waktu untuk sebuah solusi damai bagi masalah-masalah di Timor-Leste. Dalam waktu cepat setelah pengangkatan Moerdani, Monsignor Costa Lopes ditekan untuk turun dari posisinya sebagai kepala Gereja Katolik, dan dia pun meninggalkan wilayah ini. Gencatan senjata itu pecah di kota kecil sebelah timur Kraras pada Agustus 1983 setelah para anggota sebuah kesatuan Hansip asal Timor, bersama beberapa pejuang Falintil, membunuh 12 tentara Indonesia. Militer Indonesia menanggapi kejadian ini dengan serangkaian pembantaian atas penduduk sipil setempat dan penumpasan di kawasan timur dengan berbagai operasi baru.

Pemilu Indonesia di Timor-Leste: 1982

404. Dengan selesainya Operasi Keamanan, militer Indonesia tampaknya sekali lagi berkesimpulan bahwa mereka telah berhasil mengamankan wilayah ini.⁵⁵¹ Ketika pemilihan umum nasional Indonesia diselenggarakan pada 1982, ini juga diselenggarakan untuk pertama kalinya di Timor-Leste. Militer bertanggung jawab untuk menjaga keamanan bagi pelaksanaan pemilu di seluruh kepulauan Indonesia. Ini membutuhkan jumlah pasukan yang besar, dan ditambah dengan rasa percaya diri militer Indonesia yang meningkat, barangkali telah turut menyebabkan pengurangan secara tajam jumlah pasukan di Timor-Leste pada masa ini. Pers Indonesia melaporkan bahwa pemilu berlangsung di Timor-Leste tanpa insiden apapun;⁵⁵² namun para informan asal Timor menyebutkan bahwa telah terjadi gelombang penangkapan sebelum pemungutan suara.⁵⁵³

Di Viqueque militer terus-menerus berpatroli selama menjelang pemilu dan saat berlangsungnya pemilu. Setiap malam [militer] keluar-masuk rumah-rumah untuk memeriksa apakah ada orang yang datang atau pergi. Juga pada 4 Mei, sehari sebelum pemilu, ada serangan-serangan Fretilin di beberapa desa. Semua tempat pemungutan suara di sekitar Viqueque pun dipindahkan ke kota Viqueque.⁵⁵⁴

405. Hasil pemilu di Timor-Leste menunjukkan lebih daripada 99 persen suara memilih Golkar, partai Presiden Soeharto yang berkuasa. Hal ini, ditambah dengan penghitungan suara yang sangat cepat, menunjukkan dengan kuat adanya hasil yang dimanipulasi. Kemungkinan motif bagi manipulasi suara ditunjukkan setahun berikutnya ketika Gubernur Mario Carrascalão menyatakan bahwa:

Orang-orang telah diberitahu bahwa dengan memilih Golkar, mereka akan menunjukkan pandangan mereka tentang integrasi dengan Indonesia.⁵⁵⁵

406. Dalam peristiwa itu, Indonesia menggunakan suara sebagai bukti tentang adanya dukungan bagi Indonesia. Xanana Gusmão tidak menahan-nahan sarkasmnya dalam pesannya kepada PBB pada 1982:

...partainya Soeharto memenangi pemilu lagi. Di Timor-Leste, di bawah todongan senjata, semua penduduk memberikan suara yang mendukung Golkar. Sebuah paradoks yang mengherankan, Timor-Leste dan Irian Jaya merupakan “provinsi kesayangan” Soeharto dan pendukung kuat Golkar!⁵⁵⁶

Perubahan personel sipil dan militer Indonesia, dan berbagai aksi Resistansi

407. Setelah pemilu, terjadi perubahan drastis di jajaran personil utama sipil dan militer Indonesia di Timor-Leste. Pada September 1982, Mario Viegas Carrascalão, seorang mantan anggota senior UDT yang bekerja di Kementerian Luar Negeri Indonesia di New York sejak 1977 sampai 1981, dilantik sebagai Gubernur. Pada waktu yang hampir bersamaan, Komandan Korem 164, Kolonel Adolf Sahala Radjagukguk, digantikan oleh Kolonel Purwanto.*

408. Selama masa ini, Gerakan Resistansi melakukan dua langkah utama. Pertama, pada Agustus 1982, pasukan Falintil melancarkan serangan besar ke pos militer Indonesia di Mau Chiga, Ainaro, yang sering disebut sebagai *levantamento* (pemberontakan) 1982. Komisi mendengar kesaksian tentang berbagai konsekuensi dari serangan ini terhadap penduduk sipil Mau Chiga. Banyak yang dikumpulkan dan diasingkan ke Ataúro,⁵⁵⁷ sementara banyak perempuan dijadikan sasaran pelanggaran seksual yang berulang-kali dan terus-menerus (lihat Bab 7.7: Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain pelanggaran seksual). Kedua, pada September 1982, ada pertemuan rahasia antara Xanana Gusmão dan Monsignor Costa Lopes, sebagaimana diuraikan di atas butir 394. Ini merupakan tanda bagi militer Indonesia bahwa dukungan terhadap Fretilin sungguh sangat luas, dan yang mengancam pemberitaan tentang Fretilin sebagai kekuatan gerilya komunis yang terisolasi.

Pendekatan baru militer Indonesia: Negosiasi

409. Pada 1983, ABRI mengupayakan taktik baru berupa negosiasi dengan Gerakan Resistansi. ABRI pernah mengatasi berbagai pemberontakan yang ingin memisahkan

* Komisi tidak bisa memberikan keterangan tentang tanggal pasti pengangkatan Purwanto. Radjagukguk masih menjabat sebagai komandan pada 8 Juli 1982, dan Purwanto sudah menjadi komandan Korem 164 pada akhir 1982.

diri selama dasawarsa 1950-an dengan cara ini, dan pemain kunci dalam negosiasi-negosiasi di masa itu adalah Panglima ABRI, Jenderal M. Yusuf, yang turut dalam negosiasi di Sulawesi untuk menyelesaikan pemberontakan Permesta pada akhir dasawarsa 1950-an.⁵⁵⁸ Agaknya Yusuf menyetujui inisiatif ini, yang mungkin datang dari Komandan Militer Timor-Timur yang baru, Kolonel Purwanto, yang memiliki kewenangan untuk memulai berbagai kontak di tingkat lokal yang akhirnya membawa pada terjadinya sebuah gencatan senjata resmi. Pada akhir 1982 dan awal 1983, militer Indonesia mulai membuat sejumlah kesepakatan di tingkat lokal. Berbagai kontak awal untuk gencatan senjata lokal di Lautém dilakukan di Pupuru dan Pasikenu, di luar Lospalos, dan pada Februari 1983 kontak-kontak terjadi setiap minggu.⁵⁵⁹ Di antara pemimpin Fretilin yang terlibat dalam beberapa kontak awal ini serta perjalanan keliling Jakarta, yang dimaksudkan untuk meyakinkan mereka tentang kebaikan Indonesia, adalah Falo Chai⁵⁶⁰ (Fernando Teles) dan Jose da Conceição, yang merupakan mediator kunci dalam proses ini.⁵⁶¹ Militer Indonesia mengupayakan kontak-kontak serupa dengan Fretilin/Falintil di daerah koridor Venilale-Ossu, di mana David Alex (Daitula) merupakan komandan utama Falintil yang terlibat.⁵⁶² Seorang mantan Hansip mengenang:

Saya dan ipar laki-laki saya pergi ke Venilale, bertemu dengan Mayor Iswanto, [dan] melakukan kontak damai. Dia ingin bertemu dengan orang-orang dari hutan, ingin mengetahui politik mereka. Apakah mereka menginginkan kemerdekaan atau integrasi? Saya ditugaskan untuk mencari orang-orang di dalam hutan, melakukan kontak damai. Saya berhasil. Pertama-tama saya bertemu mereka di Ossulari. Di sana [saya] bertemu dengan komandan peleton, Makikit. Saya bertanya kepadanya: "Apakah Anda menginginkan kemerdekaan ataukah integrasi?" Saya menanyakan itu kepadanya. Dia menjawab: "[Rakyat] Timor-Leste lebih [menginginkan] kemerdekaan daripada integrasi."⁵⁶³

410. Berbagai pertemuan lokal antara para pejabat Indonesia dan Falintil membuka jalan bagi beberapa kontak di tingkat yang lebih tinggi. Pada 20 Maret, dua orang mayor Indonesia dan beberapa pejabat militer berpangkat lebih rendah bertemu dengan Xanana Gusmão di Liaruca, Desa Buburaka, di Subdistrik Ossu. Pada pertemuan ini, Fretilin mengajukan empat tuntutan: (1) penarikan tanpa syarat pasukan Indonesia dari Timor-Leste; (2) sebuah misi penjaga perdamaian PBB; (3) sebuah referendum yang bebas dan adil; dan (4) kehadiran Fretilin/Falintil yang berkelanjutan untuk menjaga keamanan selama proses ini.⁵⁶⁴ Kolonel Purwanto kemudian terbang ke Bali untuk mengadakan diskusi di tingkat Kodam. Tiga hari kemudian, pada 23 Maret, Kolonel Purwanto sendiri bertemu dengan Xanana Gusmão di dekat Larigutu, di subdistrik Venilale (Baucau). Gubernur Mario Carrascalão juga hadir. Pertemuan ini rupanya menghasilkan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata antara militer Indonesia dan Fretilin/Falintil.⁵⁶⁵ Yang lainnya mengikuti, dan gencatan senjata pun menyebar ke seluruh wilayah ini.

* Pertemuan ini juga dihadiri oleh Aleixo Ximenes, Verissimo Quintão, Jose da Conceição, dan Okan.

Gencatan Senjata

411. Militer Indonesia menolak mengakui bahwa mereka melakukan “negosiasi,” dan hanya menyebutnya sebagai “pembicaraan”. Indonesia tidak menginginkan publisitas internasional mengenai persoalan ini. Namun status konflik selama periode ini pada kenyataannya adalah sebuah gencatan senjata.⁵⁶⁶ Pada akhir Juli 1983, gencatan senjata masih berlaku.⁵⁶⁷ Penghentian permusuhan memungkinkan para pemimpin Resistansi bebas mengunjungi desa, kota kecil, dan bahkan berbagai pusat perkotaan. Ada beberapa pertemuan lokal antara ABRI dan Fretilin/Falintil, termasuk di Lore, Beaco, Waitame, Macadiqui, Ossu, Laissorolai, dan Hato Builico. Pada pertemuan-pertemuan ini, dimainkan pertandingan-pertandingan yang bersifat rekreasi, seperti bola voli, bahkan pasokan-pasokan disediakan bagi Fretilin/Falintil.⁵⁶⁸

412. Bagi penduduk umum, penghentian-sementara ini signifikan. Menurut Monsignor Costa Lopes:

...pada bulan Juni, sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, helikopter-helikopter Indonesia mengangkut makanan dan obat-obatan untuk para gerilyawan di pegunungan, dan membawa anggota gerilyawan yang sakit dan terluka ke rumah sakit Dili.... Masyarakat sangat senang dengan penghentian-sementara perang ini dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, bisa menanam tanaman pangan yang layak.⁵⁶⁹

413. Fretilin dan Falintil menggunakan gencatan senjata ini untuk keuntungannya, baik untuk konsolidasi internal maupun membangun jaringan dengan orang-orang Timor yang bekerja pada Indonesia.⁵⁷⁰ Falintil memasuki gencatan senjata ini dengan perspektif ketidakpercayaan. Pengalamannya adalah “amnesti” tipu-daya pada akhir dasawarsa 1970-an, di mana setelah itu banyak pemimpin Fretilin yang menyerahkan diri hilang. Dokumen CRRN yang dikeluarkan pada Juli 1983 menegaskan perspektif ini. Dokumen itu memerinci sejumlah pembunuhan dan kekejaman, dengan menyebutkan nama dan memberikan contoh-contoh kasus pembunuhan, serta keterangan tentang kenaikan pangkat kemiliteran bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut.⁵⁷¹

Pengangkatan Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI: 1983

414. Selama Maret 1983, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Indonesia mengangkat Soeharto sebagai Presiden dalam masa jabatan yang keempat kalinya. Ini berakibat pada perubahan besar di dalam ABRI yang memengaruhi gencatan senjata yang rapuh di Timor-Leste. Pada 28 Maret, Presiden Soeharto melantik Jenderal Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI.* Moerdani, salah seorang arsitek invasi Timor-Leste, membawa pengaruh yang jauh dari sikap kompromi mengenai perdamaian di wilayah ini.

* Juga pada Maret, Panglima Kodam XVI/Udayana, Brigadir Jenderal Dading Kalbuadi, digantikan oleh Brigadir Jenderal Damianus Soetarto.

Monsignor Costa Lopes dicopot

415. Salah satu tindakan pertama Moerdani sebagai Panglima ABRI adalah menekan Utusan Paus untuk Indonesia, Monsignor Pablo Puente, untuk mencopot Monsignor Costa Lopes dari jabatan kepala Gereja Katolik di Timor-Leste. Moerdani, yang juga seorang Katolik, memandang pertemuan Monsignor Costa Lopes dengan Xanana Gusmão pada September 1982 sebagai pengkhianatan. Beberapa minggu kemudian Monsignor Costa Lopes mengajukan pengunduran dirinya, meskipun dia menyatakan bahwa dirinya telah dipaksa untuk mengundurkan diri.⁵⁷² Penggantinya, Carlos Felipe Ximenes Belo yang relatif masih muda, diangkat langsung oleh Vatikan, bukannya dipilih oleh pastor-pastor Timor lewat pemilihan.⁵⁷³

416. Pada 13 Mei, dalam satu penampilan terakhirnya di depan publik sebelum meninggalkan Timor-Leste selamanya, yakni pada acara hari raya Katolik Penampakan Bunda Maria, Monsignor Costa Lopes mengemukakan kekejian yang dilakukan pasukan pendudukan. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal itu di depan publik.⁵⁷⁴ Dia pergi secara diam-diam dengan membawa bukti terperinci bahwa sebuah gencatan senjata umum telah disepakati, dalam acara pertemuan yang tidak dipublikasikan oleh Indonesia.

Gencatan senjata dirongrong

417. Sejak awal, Panglima ABRI yang baru, Jenderal Benny Moerdani, tidak yakin akan manfaat gencatan senjata. Pada 12 April Jenderal Moerdani mengunjungi Baucau untuk bertemu dengan stafnya yang bertanggung jawab untuk urusan Timor-Leste. Keesokan harinya dia memanggil Gubernur Mario Carrascalão ke Baucau. Dalam sebuah wawancara pada 2003, Mario Carrascalão mengenang pertemuan ini:

Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan semuanya berputar di sekitar jaminan. Moerdani bertanya:

“Jika diselesaikan secara damai, apakah ada jaminan bahwa Timor-Timur akan tetap merupakan bagian dari Indonesia? Bagaimana yang dirasakan rakyat? Itulah [yang] ingin kami ketahui.”

Saya [Carrascalão] berkata: “Bagaimana saya bisa tahu, Pak?”

Pertemuan itu berlangsung sekitar satu jam, pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian Benny Moerdani mengakhiri pertemuan itu lebih cepat.... Benny Moerdani memberi waktu tiga bulan. Dia berkata:

“Saya akan memberi Soetarto [Panglima Kodam Udayana] dan Purwanto [waktu], dengan dibantu oleh Gubernur, untuk membantu Timor-Timur secara damai.”⁵⁷⁵

418. Gubernur Mario Carrascalão memainkan peran menonjol dalam memajukan berbagai pembicaraan yang diselenggarakan selama gencatan senjata. Pada akhir Mei, Xanana Gusmão mengirim pesan yang meminta untuk bertemu dengan

Carrascalão, yang membawa pada sebuah pertemuan pribadi di Ariana, beberapa kilometer dari Venilale (Baucau). Namun, ruang manuver Carrascalão terbatas. Jakarta menyiarkan berita tentang gencatan senjata itu pada 10 Juni, namun tidak memublikasikan perinciannya, seperti tuntutan Falintil untuk sebuah referendum, sebagaimana yang telah disepakati. Tak lama setelah itu, Moerdani mengirim sepucuk surat kepada Xanana Gusmão:

Jangan kira bahwa kalian bisa mendapat bantuan dari negara-negara lain. Tidak ada negara di dunia ini yang bisa membantu kalian. Negara kami sendiri telah siap untuk menghancurkan kalian kalau kalian tidak mau bersikap kooperatif terhadap republik kami. Kami sedang mempersiapkan sebuah operasi—Operasi Persatuan—yang akan dilancarkan pada bulan Agustus.⁵⁷⁶

419. Batas waktu gencatan senjata selama tiga bulan yang ditentukan Moerdani ketika itu akan berakhir pada Juli. Dia merencanakan operasi baru itu untuk dilaksanakan pada Agustus guna memberi kesempatan kepada delegasi parlemen Australia yang akan berkunjung ke wilayah ini pada akhir Juli. Kemauan Moerdani untuk melancarkan serangan baru ini mengabaikan keprihatinan Menteri Luar Negeri Indonesia bahwa operasi baru ini akan berpengaruh negatif terhadap pembahasan tentang Timor-Leste yang dijadwalkan pada pertemuan Sidang Umum PBB di September.⁵⁷⁷

420. Ada kemungkinan bahwa gencatan senjata ini dirongrong dari dalam ABRI sendiri, dengan maksud untuk melanjutkan perang. Militer pernah menyatakan sebelumnya bahwa mereka menganggap operasi-operasi di Timor-Leste sebagai sarana latihan yang berharga bagi pasukan-pasukannya.⁵⁷⁸ Seorang figur yang mungkin terlibat dalam melakukan perongrongan seperti itu adalah Kapten Prabowo Subianto, yang pada waktu itu merupakan wakil komandan Detasemen 81, Kopassandha.⁵⁷⁹ Seminggu setelah Moerdani menyetujui gencatan senjata itu pada April, Kolonel Purwanto meminta untuk bertemu dengan Gubernur Mario Carrascalão di pantai, Dili. Menurut Carrascalão, Purwanto mengatakan kepadanya:

Apa yang pernah saya khawatirkan kini terjadi. Dia, Prabowo, kembali ke Timor-Leste. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, tak seorang pun, baik sipil ataupun militer, bisa memasuki atau meninggalkan Timor-Leste tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya dia datang dan pergi ke pelosok—ke Viqueque, sekitar Bibileo. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan, saya tidak tahu lagi.⁵⁸⁰

421. Komisi menerima bukti bahwa Prabowo Subianto ditempatkan di sektor bagian timur Timor-Leste saat itu. Beberapa sumber menyatakan kepada Komisi bahwa Prabowo terlibat dalam operasi untuk membawa penduduk sipil turun dari Gunung

.....
* Pada 1983, untuk pertama kalinya sejak 1975, pembahasan di Majelis Umum PBB ditunda. Pembahasan ini ditunda sampai pertemuan Majelis Umum ke-39 setahun berikutnya.

Bibileo, di mana tidak lama kemudian beberapa ratus orang dibunuh ABRI. Komisi juga menerima bukti keterlibatan Kopassus dalam pembunuhan-pembunuhan ini (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

422. Baik militer Indonesia maupun Falintil menggunakan gencatan senjata ini untuk keuntungan militernya sendiri, sebagaimana dilaporkan oleh delegasi Kedutaan Amerika Serikat yang berkunjung ke Dili pada Mei 1983:

Fretilin punya peluang untuk mengorganisasi pasukannya dan mengembangkan kepemimpinannya. Pada saat yang sama, kesatuan-kesatuan keamanan Indonesia jadi mengetahui berapa anggota Fretilin, di mana mereka berada dan siapa saja mereka, karena nama-nama telah didaftar dan telah diambil foto-foto. Berkumpulnya anggota-anggota Fretilin juga memungkinkan pasukan Indonesia untuk menyerang, jika pembicaraan gagal...⁵⁸¹

423. Pada 28 Juli, satu delegasi parlemen Australia tiba di Dili. Mereka menghabiskan waktu empat hari di Timor-Leste dari sepuluh hari kunjungannya ke Indonesia. Delegasi ini tidak mencoba untuk bertemu dengan Fretilin. Namun, di dekat Baucau delegasi ini dihentikan oleh empat anggota Falintil. Terjadi diskusi singkat, dan anggota Falintil tersebut memberikan sepucuk surat kepada delegasi parlemen itu.⁵⁸² Surat ini menyebutkan bahwa:

Bahkan selama pembicaraan-pembicaraan [perdamaian]...mereka [ABRI] terus membunuh gerilya FRETILIN (*sic*) yang ingin mendekati kamp-kamp agar bisa berhubungan dengan orang-orangnya.

424. Data Komisi mendukung pernyataan ini. Selama masa gencatan senjata, ABRI melakukan serangkaian pelanggaran, termasuk penyiksaan dan pembunuhan, khususnya penangkapan sewenang-wenang atas orang-orang yang dicurigai sebagai anggota klandestin.⁵⁸³

Berakhirnya gencatan senjata

425. Setelah usaha-usaha yang muncul dari dalam tubuh militer Indonesia sendiri untuk merongrong gencatan senjata, pada 8 Agustus, orang-orang Timor di Kraras (Lacluta, Viqueque) menyerang dan membunuh sekelompok zipur ABRI. Mereka kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Indonesia menjelaskan kejadian ini sebagai serangan yang tak beralasan terhadap “serdadu-serdadu yang tak bersenjata”.⁵⁸⁴ Para anggota Falintil menguraikannya sebagai sebuah *levantamento* (pemberontakan), serangan gabungan Hansip-Falintil terhadap ABRI itu dimaksudkan untuk menggugurkan klaim Indonesia bahwa mereka telah mengalahkan Falintil.⁵⁸⁵ Orang-orang Timor menjelaskan bahwa tentara Indonesia telah membunuh sejumlah penduduk sipil di daerah itu selama gencatan senjata.⁵⁸⁶ Para anggota batalion zipur pada waktu itu melecehkan seorang perempuan Timor. Kejadian ini segera memicu serangan gabungan Falintil-Hansip yang membunuh sekurangnya 12 tentara.⁵⁸⁷

426. Tanggapan ABRI adalah tindak kekerasan yang dahsyat terhadap penduduk sipil. Anggota Hansip yang terlibat dalam pembunuhan tentara Indonesia itu telah membelot ke Falintil.* Penduduk sipil dari desa telah melarikan diri—sebagian, yang kebanyakan adalah para lelaki yang cukup kuat, ke hutan, dan sebagian lainnya ke Viqueque. Pasukan dari Batalion 501 memburu mereka. Para lelaki dikumpulkan dan ditembak di daerah Tahuben. Kelompok lebih kecil yang kebanyakan terdiri atas para lelaki tua, perempuan, dan anak-anak ditangkap di Viqueque dan ditembak di sebuah lokasi dekat Buicaren. Laporan-laporan tentang korban mati pada waktu itu melebihi 200 orang.⁵⁸⁸ Militer Indonesia sendiri mengakui 80 orang.⁵⁸⁹ Pada 1985, Uskup Belo kemudian mendaftarkan nama 84 korban mati.⁵⁹⁰ Orang-orang yang selamat dipaksa tinggal di Lalerek Mutin, di mana diperkirakan ada sebagian besar orang meninggal akibat kelaparan dan penyakit.⁵⁹¹ Sampai saat ini, Kraras dikenal sebagai 'desa janda'.⁵⁹²

427. Gencatan senjata selesai. Karena "solusi damai"-nya telah gagal, Kolonel Purwanto pun digantikan oleh Kolonel Rudito.⁵⁹³ Pada 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, Jenderal Moerdani mengumumkan berbagai rencana barunya untuk menghancurkan Resistansi:

Kali ini kita akan memukul mereka tanpa ampun.⁵⁹⁴

428. Operasi Persatuan dimulai pada September 1983.† Operasi ini memfokuskan diri ke wilayah timur tempat Falintil masih kuat, dan menampilkan Kopassandha sebagai pasukan garis depan untuk pertama kalinya, dengan didukung kuat oleh kekuatan udara.⁵⁹⁵ Mungkin salah satu alasan untuk ini adalah pembelotan massal Hansip ke Falintil setelah peristiwa Kraras.⁵⁹⁶ Militer Indonesia kekurangan tenaga manusia dan sangat tidak memercayai para prajurit asal Timor. Operasi ini memicu terjadinya perpindahan besar-besaran orang-orang ke kota.

429. Operasi-operasi ICRC berhenti di wilayah daratan utama, dibatasi hanya di Pulau Ataúro. Orang-orang garis keras militer sekali lagi berkuasa.⁵⁹⁷ Gereja Katolik merupakan satu-satunya lembaga independen yang tersisa di Timor-Leste. Tapi, Gereja di Timor-Leste sangat terisolasi dari Gereja di Indonesia dan Vatikan, yang umumnya bungkam tentang situasi hak asasi manusia di wilayah ini. Pada 1983, untuk pertama kalinya Konferensi Waligereja Indonesia mengungkapkan dukungan bagi rakyat Timor-Leste yang menderita dan menyerukan adanya pengertian dan kejujuran dari para pembuat kebijakan.⁵⁹⁸ Meski ini bisa menjadi sebuah permulaan yang signifikan, Konferensi Waligereja itu kemudian menjaga jarak dari posisi dukungan ini.

.....
* Mungkin suatu pengaruh tambahan yang menyebabkan pembelotan Hansip tersebut adalah kebijakan militer pada waktu itu yang menurunkan pangkat Hansip/Wanra menjadi Ratih. Ratih memiliki status yang lebih rendah dan tidak dibayar. Lihat Korem 164 Insop/03/II/1982 tentang Perlawanan Rakyat Terlatih, hal. 16-18.

† Juga dikenal sebagai Operasi Sapu Bersih.

Konsolidasi dan awal perubahan: 1984 - 1991

Tinjauan

430. Sepanjang bagian besar dasawarsa 1980-an, Timor-Leste tetap tertutup bagi dunia luar. Falintil meneruskan resistansi gerilya bersenjata dan kehadiran ABRI/TNI di wilayah tersebut tetap tinggi. Tapi, operasi militer besar berkurang pada paruh kedua dasawarsa tersebut, dan Pemerintah Indonesia berupaya untuk “menormalisasikan” wilayah ini dengan menjalankan sejumlah kebijakan dan program nasional penting, termasuk kebijakan transmigrasi dan pendidikan.

431. Proses restrukturisasi Resistansi yang dimulai pada 1981 terus berlanjut sepanjang dasawarsa ini. Pada 1983, persatuan nasional diumumkan sebagai kebijakan Resistansi, dan pada 1988, Dewan Nasional Resistansi Maubere (Conselho Nacional da Resistência Maubere, CNRM) menjadi badan tertinggi Resistansi, dengan tujuan untuk membangun basis nasionalis. Falintil dipisahkan dari Fretilin, dan panglimanya, Xanana Gusmão mengundurkan diri dari partai, sebagai upaya lebih jauh untuk menunjukkan pendekatan yang inklusif ini.

432. Dom Carlos Felipe Ximenes Belo menggantikan Monsignor Martinho da Costa Lopes sebagai Administrator Apostolik dari Dioses Dili, dan pada 1988 dinobatkan sebagai Uskup. Selama dasawarsa tersebut, ia menjadi semakin lantang dalam membela rakyat Timor-Leste, dan suratnya pada akhir 1988 kepada Sekretaris Jenderal PBB yang menyerukan PBB untuk memenuhi tugas dekolonisasinya di Timor-Leste, berdampak besar secara internasional.

433. Gerakan pemuda Resistansi mulai tumbuh sejak pertengahan dasawarsa 1980-an, khususnya di sejumlah sekolah di Dili. Karena banyak mahasiswa Timor-Leste yang kuliah di Indonesia, gerakan ini meluas ke organisasi mahasiswa pada akhir dasawarsa tersebut. Aktivisme pemuda sangat menonjol selama kunjungan Paus Yohanes Paulus II di akhir 1989. Baik Pemerintah Indonesia maupun Resistansi berupaya untuk memanfaatkan kunjungan Paus di Timor-Leste ini untuk meraih keuntungan politis bagi setiap pihak, karena kunjungan tersebut memiliki arti rohani yang penting bagi masyarakat yang sebagian besar beragama Katolik. Para mahasiswa dari gerakan klandestin yang tengah berkembang mengambil kesempatan ini untuk memberitahukan kepada Paus dan media internasional yang menyertainya mengenai hasrat mereka untuk penentuan nasib sendiri, dengan mengadakan demonstrasi publik besar-besaran pertama sejak invasi Indonesia 1975. Ini menjadi awal dari sebuah siklus demonstrasi dan penumpasan pada dasawarsa 1990-an.

434. Secara umum, PBB tidaklah begitu efektif selama periode ini dalam upaya mencari solusi politik yang langgeng mengenai masalah Timor-Leste. Warga Timor-Leste dalam diaspora dan masyarakat sipil internasional mengandalkan Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk tetap mempertahankan persoalan ini dalam agenda PBB. Ketika Tembok Berlin runtuh

pada 9 November 1989, dan menandai akhir dari konteks Perang Dingin yang telah mewarnai konflik ini sejak invasi dan pendudukan Timor-Leste, peristiwa ini membawa harapan baru bagi penyelesaian damai dan pasti mengenai konflik ini.

Perkembangan Resistansi

435. Pada awal 1980-an, sebagian besar penduduk sipil melakukan urbanisasi dan bermukim di berbagai kota dan desa, ketimbang ikut Falintil di gunung-gunung. Menjelang pertengahan dasawarsa 1980-an, masa penahanan massal telah lewat. Indonesia memulai proses normalisasi di Timor-Leste. Berbagai lembaga negara seperti pemerintah provinsi, parlemen daerah, dan berbagai departemen pelayanan masyarakat telah didirikan, dengan pegawai dan mulai berfungsi. Hal ini membuat Indonesia mulai dapat menjalankan sejumlah program pembangunan nasionalnya di Timor-Leste, sehingga ada benarnya bahwa Indonesia melaksanakan program yang membawa pembangunan di wilayah ini pada periode ini. Tapi, penilaian yang lebih seksama mengenai berbagai program ini menunjukkan adanya penekanan pada infrastruktur pendudukan, khususnya pembangunan jalan dan gedung pemerintahan. Bidang lain yang mendapat anggaran pembiayaan pemerintah yang cukup penting adalah pembangunan sekolah. (Lihat Bab 7.9.: Hak ekonomi dan sosial, dan Bagian 4: Rezim pendudukan). Indonesia mempunyai harapan tinggi bisa menarik simpati pemuda Timor.

436. Perubahan-perubahan visi dan struktur Resistansi pada 1981 dan 1983 memerlukan waktu untuk menjadi matang. Sementara itu Xanana Gusmão berupaya mengambil serangkaian langkah praktis bagi masa depan jangka panjang Resistansi. Pada 7 September 1985, pemuda Katolik menulis secara rahasia kepada Xanana Gusmão, untuk meminta klarifikasi tentang posisi Resistansi mengenai masa depan perjuangan dan segala tantangan yang dihadapinya. Xanana Gusmão menulis tanggapan yang terperinci dalam pesannya tertanggal 20 Mei 1986 kepada Pemuda Katolik di Timor-Leste dan Mahasiswa di Indonesia.⁵⁹⁹ Ia menyerukan para pemuda untuk tetap teguh memegang identitas Timornya dan perjuangan akan hak-haknya. Pesan ini menunjukkan betapa Gusmão menganggap penting generasi muda dalam reposisi Resistansi.

437. Pada Desember 1988, Xanana Gusmão membuat berbagai perubahan fundamental dalam Resistansi, dalam apa yang dikenal sebagai Penyesuaian Kembali Struktur Resistansi atau RER. Berbagai perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat upaya membangun basis Resistansi nasional seluas-luasnya. CRRN dibubarkan, dan digantikan oleh Dewan Nasional Resistansi Maubere (Concelho Nacional da Resistência Maubere, CNRM), yang dimaksudkan untuk menjadi organisasi yang memayungi semua partai politik yang mendukung kemerdekaan. Falintil dideklarasikan sebagai tentara nasionalis yang netral, dan tidak lagi sebagai bagian dari Fretilin. Xanana Gusmão sendiri mengundurkan diri dari Fretilin, untuk menjadi Presiden CNRM, sementara terus menjadi Panglima Falintil.⁶⁰⁰ Pembentukan CNRM merupakan langkah besar menuju konsolidasi dan memberi mekanisme politik praktis pada gagasan persatuan nasional. Selama dasawarsa

1980-an, berbagai kelompok klandestin mulai menjamur, khususnya di kota-kota. Jumlah kelompok ini meningkat selama akhir dasawarsa 1980-an, namun karena faktor bahayanya kegiatan klandestin ini sebagian besar berupa kelompok kecil dan terisolasi, dengan hanya sedikit jaringan yang berbasis luas. Sadar akan hal ini, CNRM lalu membentuk *Comité Executivo da CNRM na Frente Clandestina* (Komite Eksekutif CNRM bagi Front Klandestin, atau yang lebih dikenal sebagai *Comité Executivo*, CE) pada tahun 1990.⁶⁰¹ Tugas CE adalah untuk mengoordinasikan, mengarahkan, dan memantau segala kegiatan bawahan. Komite ini membangun hubungan dengan kelompok-kelompok bawahan di seluruh Timor-Leste atau di luar negeri, termasuk di Indonesia.⁶⁰²

438. Berbagai perubahan pada gerakan Resistansi ini juga memperkuat front diplomatik eksternal, diaspora internasional orang Timor-Leste, dan masyarakat sipil internasional. Pada 1983, setelah ada larangan Pemerintah Australia sejak masa invasi Indonesia, sebuah delegasi Fretilin berhasil melakukan kunjungan ke Australia dan berbicara di hadapan 1.500 hadirin dari berbagai kalangan di Melbourne. Hal ini memberi banyak semangat kepada warga Timor-Leste di Australia, yang sampai saat itu kesulitan untuk memengaruhi publik Australia tanpa dukungan langsung dari para pemimpin kunci.⁶⁰³ Pada 1980-an, warga Timor-Leste yang lari dari Timor-Leste pada 1970-an sudah dapat menyesuaikan diri di negeri baru seperti Portugal dan Australia, dan menjadi lebih efektif dalam perjuangan bagi pengakuan internasional. (Lihat Bab 7.1.: Hak penentuan nasib sendiri.)

439. José Ramos-Horta terus melakukan kunjungan ke mana-mana, untuk memupuk dukungan di setiap negara yang ia kunjungi. Ia bekerja keras menggali dukungan masyarakat sipil internasional serta melalui jalur-jalur diplomatik resmi. Misalnya, kunjungannya ke Jepang pada Maret 1985 adalah atas undangan beberapa kelompok warga masyarakat Jepang, dan dia dapat memperkenalkan masalah Timor-Leste langsung ke publik Jepang.⁶⁰⁴ Dengan dukungan dan terkadang bimbingan berbagai kelompok masyarakat sipil, warga Timor-Leste lainnya juga meningkatkan upaya lobi internasional yang lebih luas selama 1980-an.

Represi dan pemenjaraan

440. Tanggapan Indonesia atas semakin menguatnya perlawanan klandestin selama dasawarsa 1980-an adalah dengan meningkatkan fokus pada Resistansi dan mencari cara untuk melenyapkannya. Salah satu caranya adalah dengan membawa tahanan politik Timor-Leste keluar wilayah ini. Pada 1983, 69 orang tahanan yang diduga terlibat dalam pemberontakan Kraras dibawa dari penjara Balide ke Kupang di Timor Barat, Indonesia. Hanya empat belas dari tahanan ini kembali ke Timor-Leste.⁶⁰⁵ Para tahanan, yang biasanya adalah tersangka anggota resistansi klandestin, sering dipindahtangankan dari satu aparat keamanan ke aparat lain, dan

* Beberapa contoh adalah kunjungan ke Konferensi Pasifik yang Bebas Nuklir dan Merdeka di Vanuatu pada 1983 oleh Abilio Araújo dan Roque Rodrigues, dan ke Konferensi Perempuan Dunia di Nairobi oleh Emilia Pires dan Ines de Almeida pada 1985.

siksaan dan penganiayaan merupakan hal biasa. Selama periode ini, para tahanan terkadang dibawa ke berbagai tempat seperti Bali untuk diinterogasi.⁶⁰⁶ Sebagai konsesi bagi normalisasi prosedur administrasi selama 1980-an, para tahanan politik kadang dibawa ke pengadilan untuk diadili. Namun, pengadilan-pengadilan seperti ini sering hanya merupakan bayang-bayang dari keadilan dan tidak terlalu memedulikan hak-hak para tersangka.

441. Penjara Cipinang di Jakarta yang dijaga ketat digunakan untuk menahan para tahanan Timor-Leste selama periode ini. Komisi mendengarkan kesaksian dari aktivis hak asasi manusia Indonesia Ade Rostina Sitompul, yang menjadi pengunjung reguler tahanan Timor-Leste di penjara Cipinang mulai 1987. Dia mengatakan kepada Komisi bahwa pada 1987, terdapat 47 tahanan politik Timor-Leste di Cipinang, dan kondisi pengamanan terhadap mereka jauh lebih ketat dibandingkan para tahanan yang lain.⁶⁰⁷ Jauh dari keluarga menjadi penderitaan terberat bagi para tahanan Timor-Leste yang dibawa ke penjara-penjara di Jawa atau daerah lain di Indonesia. (Lihat Bab 7.6: Pengadilan politik.)

Kebangkitan gerakan pemuda klandestin

442. Pada pertengahan dasawarsa 1980-an, sejumlah sel klandestin pelajar dibentuk di berbagai sekolah menengah di Dili. Sekitar 1986, OJETIL (*Organização de Juventude Católica de Timor-Leste*, Organisasi Pemuda Katolik Timor-Leste)^{*} dibentuk oleh para aktivis pelajar yang berbasis di Externato de São José,⁶⁰⁸ yang kemudian menjadi organisasi berbasis nasional. Banyak di antara para siswa ini menjalani masa kanak-kanaknya di hutan selama masa invasi dan perang besar-besaran. Banyak yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Resistansi di hutan.⁶⁰⁹ Mereka membentuk apa yang akan menjadi dasar bagi generasi baru resistansi yang akan terus berlanjut pada dasawarsa 1990-an.

443. Pada 1986, Universitas Timor-Timur (Untim), perguruan tinggi pertama di Timor-Leste, dibuka di Dili. Sebelumnya, pada 1985, Gubernur Mário Viegas Carrascalão menjalankan kebijakan pendidikan yang memperluas kesempatan mahasiswa Timor-Leste melanjutkan pendidikannya di berbagai universitas di Indonesia. Ini merupakan perkembangan penting dalam kesempatan pendidikan bagi anak-anak muda Timor-Leste, dan berdampak penting pada hubungan antara kalangan nasionalis dan aktivis hak asasi manusia Timor-Leste dan rekan-rekan mereka dari Indonesia. (Lihat Bab 7.1: Hak penentuan nasib sendiri, bagian tentang masyarakat sipil.)

444. Kelompok mahasiswa klandestin Renetil (*Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste*, Resistansi Nasional Pelajar Timor-Leste) berdiri pada 1988 di Bali, dan beroperasi di Bali dan Jawa.⁶¹⁰ Dalam suasana kontrol yang ketat atas kegiatan politik mahasiswa pada zaman rezim Orde Baru, mahasiswa Timor-Leste juga mendirikan organisasi yang lebih moderat, yakni Impettu (Ikatan Mahasiswa,

* Setelah 1991, OJETIL berganti nama menjadi OJETIL (*Organização de Juventude de Timor-Leste*), yang menghapus kata Católica, untuk mengedepankan ciri nasionalisnya.

Pemuda, dan Pelajar Timor-Leste) untuk beroperasi sebagai wadah mahasiswa Timor-Leste di Indonesia yang lebih dapat diterima oleh penguasa. Ini menjadi alat penting bagi aktivisme mahasiswa selama 1990-an.⁶¹¹

Gereja Katolik

445. Pada 1983, Carlos Filipe Ximenes Belo menjadi Administrator Apostolik Diosis Dili, menggantikan Monsignor Martinho da Costa Lopes sebagai kepala Gereja di Timor-Leste. Walau mendapat tekanan dari Indonesia, Vatikan tetap menolak untuk mengakui Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia. Pada 19 Juni 1988, Belo diberi gelar Uskup Lorium, sebuah dioses di Italia yang sudah tidak berjalan lagi.⁶¹²

446. Monsignor Belo tidak banyak dikenal di Timor-Leste ketika ia mulai menjalankan posisinya sebagai kepala Gereja. Dia berada di luar negeri belajar di Portugal dari 1968 sampai 1974, dan sekali lagi dari Agustus 1975 sampai 1981, ketika ia kembali ke Kolese Fatumaca di Baucau. Seperti pendahulunya Martinho da Costa Lopes, Belo segera membuktikan diri sebagai pemimpin yang independen, dan tidak akan tinggal diam menyaksikan kekerasan yang terjadi di sekitarnya. Baru berusia empat puluh tahun ketika diangkat menjadi uskup, Belo memusatkan perhatian keuskupannya pada pemuda Timor-Leste. Mulai akhir 1980-an sampai akhir 1990-an, tugas sehari-harinya sebagai uskup membuat dia selalu sadar tentang memanasnya ketegangan antara para pemuda Timor-Leste yang ingin mendapat kebebasan lebih banyak dan aparat militer Indonesia yang berupaya menumpas segala tanda resistansi pemuda. Di tahun-tahun berikutnya, kediaman Uskup Belo menjadi tempat berlindung bagi banyak pemuda yang mencari perlindungan dari militer dan agen-agennya.

447. Pada Februari 1984, karena sangat tersentuh dengan dampak operasi 'Pagar Betis' militer Indonesia, ia menulis kepada Martinho da Costa Lopes, menceritakan buruknya kondisi orang-orang yang terkepung oleh kampanye ini, dan orang-orang lain yang dipenjarakan, serta pihak militer yang menjadikan berbagai sekolah Katolik sebagai sasaran penggeledahan dan interogasi para siswanya.⁶¹³ Pada 1985, ia dengan lantang berbicara menentang program Keluarga Berencana Pemerintah Indonesia, yang ia pandang dipaksakan terhadap rakyat Timor-Leste.⁶¹⁴

448. Pada 1988, ketika pasukan keamanan melancarkan pembersihan yang represif sebelum kunjungan singkat Presiden Soeharto ke wilayah ini, Uskup Belo merespons dengan menyiapkan sebuah pernyataan yang akan dibacakan di seluruh gereja di wilayah ini pada 5 Desember:

Kami tidak setuju dengan sistem yang biadab ini dan mengutuk kebohongan propaganda yang mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak ada di Timor-Leste.⁶¹⁵

449. Surat ini sampai ke kalangan pers internasional, dan dikutip di *New York Times* pada 22 Januari 1989.

450. Pada 6 Februari 1989, Uskup Belo menulis sebuah surat yang lebih mengesankan lagi, kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Javier Perez de Cuellar. Dalam surat itu, ia meminta Sekretaris Jenderal “untuk memulai proses dekolonisasi yang demokratis dan sesungguhnya di Timor-Leste untuk diwujudkan melalui referendum.”⁶¹⁶ Ia menyangkal klaim Indonesia bahwa rakyat Timor-Leste telah memilih untuk berintegrasi, menganggap bahwa Portugal melihat berjalannya waktu sebagai solusi, dan menyatakan bahwa “sementara itu kami perlahan mati sebagai suatu bangsa dan negara.” Surat ini dikirimkan dari luar Timor-Leste karena alasan keamanan. Walaupun tidak mendapat tanggapan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa selama bertahun-tahun, surat ini memberi dampak yang berarti. Bagi Uskup Belo, ini mendedahkan tekanan yang besar baik dari penguasa Indonesia maupun dari Vatikan.⁶¹⁷

Situasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa

451. Pada 1982, keadaan politik di Portugal mengalami perkembangan penting yang pada waktunya memberi dampak bagi perjuangan penentuan nasib sendiri di Timor-Leste. Partai Sosialis Mario Soares mengambil alih pemerintahan dan secara efektif mengakhiri masa ketidakstabilan dan kelumpuhan yang telah menjangkiti politik Portugis sejak Revolusi Anyelir 1974. Tidak lama kemudian, pemerintahan Mario Soares mengaktifkan kembali dukungan bagi perjuangan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor-Leste, dan penerusnya menggunakan sebaik-baiknya posisi baru Portugal di Uni Eropa untuk mendukung perjuangan ini. (Lihat Bab 7.1.: Hak penentuan nasib sendiri.)

452. Pada 1982, apa yang sebelumnya telah menjadi peristiwa tahunan Sidang Umum, yakni resolusi yang menyerukan penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste, hampir saja dikalahkan; resolusi ini didukung oleh 50 negara, ditentang oleh 46, dengan 50 lainnya tidak memberi suara. Mosi ini juga mengimbau Sekretaris Jenderal untuk memulai pembicaraan dengan semua pihak terkait untuk “mencapai penyelesaian yang menyeluruh mengenai masalah Timor-Leste.”⁶¹⁸

453. Hal ini tampaknya menjadi kemenangan diplomatik yang berarti bagi Indonesia. Komisi mendengarkan kesaksian dari Mantan Pejabat Senior PBB Francesc Vendrell bahwa ini merupakan masa ketika dalam komunitas internasional:

*Tidak ada yang percaya bahwa orang Timor... benar-benar dapat melawan dan... semuanya percaya bahwa hanyalah soal waktu sebelum Timor-Leste diakui oleh semuanya sebagai bagian dari Indonesia.*⁶¹⁹

454. Sejumlah warga Timor-Leste di pengasingan di luar negeri memberi kesaksian kepada PBB selama masa ini. Upaya diplomatik ini dipimpin oleh José Ramos-Horta. Ian Martin, Sekretaris Jenderal Amnesty International dari 1986 sampai 1992, mengenang José Ramos-Horta di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada masa itu:

Saya ingat bagaimana José Ramos-Horta terlihat sendiri tanpa teman di Aula Delegasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, ketika hampir semua diplomat yakin bahwa hanyalah soal waktu sebelum penggabungan oleh Indonesia atas Timor-Leste diterima oleh komunitas internasional seutuhnya...⁶²⁰

455. Pada 1983, perdebatan mengenai Timor-Leste ditangguhkan untuk memberi waktu bagi Sekretaris Jenderal memperoleh kemajuan dalam konsultasinya untuk mencapai solusi yang tuntas. Namun sebenarnya, Portugal takut untuk membawanya ke Sidang Umum setelah hampir kalah pada 1982. Sekretaris Jenderal pada waktu itu Javier Perez de Cuellar menafsirkan para pihak yang terlibat dengan sempit, yakni hanya Portugal dan Indonesia. Para pemimpin Timor-Leste samasekali tidak dilibatkan. Apa yang disebut perundingan tripartit pertama antara Portugal, Indonesia, dan perwakilan PBB diadakan pada 1983. Mereka tidak mencapai banyak kemajuan dalam berbagai pembicaraan ini, karena tidak ada pihak yang mau mengalah.

456. Walaupun persoalan Timor-Leste disahkan dalam agenda Sidang Umum PBB setelah 1983, selama dasawarsa 1980-an terdapat dua mekanisme penting bagi pembahasan internasional mengenai persoalan Timor-Leste, yakni Komisi Hak Asasi Manusia dan Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi. Pada 1985, persoalan ini dihapuskan dari agenda Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi mendengar kesaksian dari Francesc Vendrell mengenai inisiatifnya untuk memperbolehkan Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi untuk menampung berbagai submisi baik dari sejumlah lembaga nonpemerintah maupun pemerintah.⁶²¹ Ini memungkinkan antara 20 sampai 25 LSM internasional melakukan perjalanan tahunan ke New York untuk mengajukan petisi kepada Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi untuk mendukung penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste. Sejumlah LSM internasional besar sering menyerahkan waktu bicara mereka bagi para utusan asal Timor-Leste (Lihat Bab 7.1.: Hak penentuan nasib sendiri, bagian Masyarakat Sipil). Hal ini mungkin menjadikan Timor-Leste sebagai topik yang paling diperdebatkan oleh Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi. Pada 14 September 1989, Sekretaris Jenderal PBB Javier Perez de Cuellar menerbitkan laporan mengenai kemajuan yang sudah dicapai, dan menyimpulkan bahwa usulan kunjungan ke Timor-Leste oleh Misi Parlemen Portugal akan dapat membantu dalam upaya mencari solusi yang bisa diterima secara internasional.

Kunjungan Paus Yohanes Paulus II

457. Kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Timor-Leste pada 12 Oktober 1989 merupakan peristiwa yang menggembirakan dan melegakan bagi banyak orang di wilayah yang tertindas ini. Ini juga merupakan peristiwa bersejarah, karena baru kali ini Timor-Leste mendapat kunjungan seorang kepala negara sepanjang masa pendudukan Indonesia. Kontingen besar media internasional yang menyertai kunjungan Sri Paus memberi kesempatan publisitas yang belum pernah ada

sebelumnya selama empat belas tahun pendudukan. Harapan orang sangat tinggi. Para pendukung kemerdekaan menantikan kecaman atas pendudukan Indonesia. Indonesia menantikan pengakuan integrasi dan penggabungan Gereja Timor-Leste ke dalam Konferensi Waligereja Indonesia. Simpati Paus terhadap tekanan yang dihadapi oleh para rohaniwan Gereja Timor ditunjukkan dalam sebuah pertemuan antara mereka yang juga dihadiri oleh pihak berwenang Indonesia; muncul sebuah pertanyaan mengenai bahasa apa yang akan digunakan dalam pertemuan tersebut, dan agar terdapat kerahasiaan antara Sri Paus dan para pastor Timor-Leste, bahasa Italia dipilih. Sebagian besar rohaniwan Timor pernah belajar di Roma.⁶²²

458. Sri Paus meniti garis diplomatik yang rumit selama di Timor-Leste, dengan tidak menunjukkan posisi yang jelas mengenai status politik wilayah ini. Dia secara terbuka mengakui penderitaan orang Timor, dan mendatangkan kenyamanan spiritual dan moral bagi banyak orang. Dalam khotbahnya Paus Yohanes Paulus II mengatakan:

Apakah makna dari menjadi garam di Bumi dan cahaya dunia di Timor hari ini? Sudah selama bertahun-tahun hingga saat ini, Anda telah mengalami kehancuran dan kematian sebagai akibat konflik; Anda sudah tahu apa artinya menjadi korban kebencian dan perjuangan. Banyak orang yang tidak berdosa meninggal, sementara yang lainnya terus menjadi mangsa pembalasan dan dendam... Penghormatan bagi hak-hak yang menjadikan hidup lebih manusiawi harus dengan tegas dijamin; hak-hak perorangan dan hak bagi keluarga-keluarga.⁶²³

459. Sebelum kunjungan tersebut, pihak berwenang Indonesia telah menahan sejumlah aktivis pemuda untuk mencegah kemungkinan terjadinya demonstrasi selama kunjungan Sri Paus.⁶²⁴ Berbagai upaya ini terbukti tidak berhasil, dan demonstrasi yang kemudian terjadi menjadi peristiwa penting dalam kegiatan gerakan klandestin pemuda.

460. Ketika Paus Yohanes Paulus II merampungkan misanya yang diperkirakan dihadiri sekitar 100.000 orang di Tasitolu di barat Dili, sekelompok kecil pemuda merentangkan sejumlah spanduk dan meneriakkan slogan yang menyerukan kemerdekaan dan hak asasi manusia. Terjadi beberapa bentrokan dengan aparat keamanan dan polisi Indonesia, yang menjadi peristiwa memalukan bagi Indonesia.

461. Ini merupakan demonstrasi terbuka pertama dalam sebuah kunjungan internasional sejak masa invasi Indonesia. Hal ini semakin memberanikan para pemuda dan mengakibatkan tumbuhnya sejumlah kelompok baru dan mendorong kerja sama di antara mereka. Pemimpin pemuda klandestin Constancio Pinto belakangan menulis:

Tahun 1989 menandakan awal aksi non-kekerasan di kota-kota dan perdesaan. Sebelumnya, walaupun orang-orang terorganisasi dalam kelompok-kelompok kecil, wawasan mereka hanya terbatas pada sel-sel mereka sendiri. Terkadang mereka merasa, "Apakah

hanya kita yang berjuang untuk ini?” Bagaimana dengan yang lain?” Ketika gerakan-gerakan protes mulai terjadi, orang-orang tiba-tiba membuka pikiran dan persepsi mereka: “Bukan hanya kita yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri! Yang lain juga!” Selanjutnya semakin mudah bagi kita. Ketika kita mulai mendekati mereka, kita bisa mengatakan bahwa kita sudah melakukan ini, jadi mari kita lakukan ini bersama.⁶²⁵

462. Pihak penguasa Indonesia menahan banyak orang pada hari-hari sesudah demonstrasi ini dalam upaya untuk menumpas munculnya tanda resistansi baru ini. Komisi mendengar banyak kesaksian mengenai interogasi dan penyiksaan.⁶²⁶

463. Ketika Duta Besar Amerika Serikat John Monjo datang ke Timor-Leste pada Januari 1991 dalam misi pencarian fakta mengenai dugaan penahanan dan penyiksaan yang terjadi setelah demonstrasi pada saat kunjungan Sri Paus, terjadi demonstrasi di luar Hotel Turismo tempat ia menginap. Lusinan anak muda meneriakkan slogan menentang pendudukan Indonesia dan menyerahkan pernyataan tertulis kepada PBB untuk menjalankan referendum mengenai status politik Timor-Leste. Pemimpin pemuda Gregorio Saldanha menceritakan kepada Komisi:

*Demonstrasi [pada saat kunjungan] Duta Besar AS berlangsung selama tiga hari. Hari pertama hanya ada beberapa orang, pada hari kedua semakin banyak yang ikut, dan pada hari ketiga bukan hanya yang muda-muda, tetapi yang tua juga ikut, termasuk ibu-ibu, yang berdoa dengan rosario di jalanan.*⁶²⁷

464. Lebih banyak penangkapan dan penyiksaan terjadi setelah serangkaian demonstrasi ini, dan pihak intelijen Indonesia menggandakan upaya mereka untuk mengendalikan gerakan klandestin pemuda.⁶²⁸

Jakarta membuka Timor-Leste

465. Ketika Presiden Soeharto menandatangani keputusan pada Desember 1988 yang memberi Timor-Leste “status yang setara” dengan ke-26 provinsi lainnya di Indonesia, wilayah ini yang sebelumnya benar-benar tertutup bagi pengunjung internasional, kini dibuka.⁶²⁹ Hal ini memberi kesempatan baru bagi rakyat Timor untuk berhubungan dengan dunia luar. Walaupun berada jauh dari jalur pariwisata Asia, antara 1989 dan 1991, lebih daripada 3.000 pengunjung internasional datang ke Timor-Leste. Ini termasuk wartawan, pekerja LSM, dan aktivis yang berkunjung dengan visa turis, yang membawa informasi masuk dan keluar dan banyak di antaranya menjadi pendukung lantang setelah melihat situasi di Timor-Leste (lihat Bab 7.1.: Hak penentuan nasib sendiri).

466. Pada September 1990, pengacara dan aktivis buruh Australia Robert Domm berkunjung ke Timor-Leste dan dengan bantuan jaringan klandestin berhasil mewawancarai Xanana Gusmão di persembunyiannya di gunung. Wawancara ini

merupakan wawancara langsung pertama dengan pemimpin gerilya. Wawancara ini disiarkan oleh Australian Broadcasting Commission (ABC) dan semakin meningkatkan pamor dan status internasional Xanana Gusmão.⁶³⁰ Pembalasan militer Indonesia terhadap orang-orang yang turut membantu mengadakan wawancara ini sungguh kejam.

467. Jumlah orang Timor-Leste yang belajar dan bekerja di Indonesia juga meningkat sebagai konsekuensi pembukaan Timor-Leste ini. Hal ini memungkinkan kalangan nasionalis Timor di antara mereka untuk membangun hubungan dengan masyarakat sipil Indonesia dan mancanegara yang bekerja atau tengah berkunjung ke Jakarta, termasuk para wakil media. Hal ini memberi dampak mendalam kepada gerakan hak asasi manusia dan prodemokrasi baik di Indonesia dan Timor-Leste pada 1990-an.⁶³¹

Perkembangan internasional menjelang akhir dasawarsa 1980-an

Perjanjian Celah Timor

468. Pada 11 Desember 1989, Pemerintah Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian tentang eksploitasi sumberdaya alam Celah Timor. Hal ini tidak mengejutkan Xanana Gusmão, yang sebelumnya sudah mengkritik Pemerintah Australia dalam berbagai pesannya sejak 1986, ketika ia mengatakan bahwa Australia berupaya mencari solusi mengenai persoalan Timor-Leste untuk mendapatkan akses ke sumberdaya alam di Laut Timor.⁶³² Organisasi-organisasi hak asasi manusia, para wartawan, dan aktivis di seluruh dunia mengkritik perjanjian tersebut, dan hal ini menjadi sumber pertentangan yang terus-menerus. Upacara penandatanganan dilakukan di atas pesawat yang terbang melintas di atas Laut Timor, dan foto Menteri Luar Negeri Gareth Evans dan Ali Alatas menjadi alat paling disukai gerakan solidaritas internasional dalam upayanya untuk menyorot segala ketidakadilan dalam persoalan Timor-Leste.⁷

Akhir Perang Dingin

469. Runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 secara dramatis menandai akhir Perang Dingin. Ini juga mengakhiri konteks geopolitik yang mewarnai konflik sejak masa invasi 1975. Gerakan sosial untuk kebebasan di seluruh dunia juga mendorong semangat banyak warga Timor-Leste. Dogma yang diusung oleh banyak kalangan komunitas internasional bahwa pendudukan dan integrasi Indonesia atas Timor-Leste tidak dapat dicegah, walaupun tidak sah secara hukum, tampak semakin sulit untuk dipertahankan. Dunia sedang mengalami perubahan.

* Pada 20 Mei 2002, perjanjian ini digantikan dengan Kesepakatan Laut Timor antara Australia dan Timor-Leste yang baru merdeka.

Titik-balik

Tinjauan

470. Gerakan kemerdekaan Timor-Leste berubah pada 1990-an. Fokus bergeser dari kampanye gerilya ke kampanye diplomatik, dengan dukungan kuat dari berbagai kelompok mahasiswa di Timor-Leste dan Indonesia, dan dukungan internasional yang semakin meningkat. Pergeseran ini didukung oleh tiga kejadian penting: Pembantaian Santa Cruz, penangkapan Xanana Gusmão, dan penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian kepada Uskup Belo dan José Ramos-Horta.

471. Pembantaian Santa Cruz pada 12 November 1991 mengubah secara permanen cara dunia memandang pendudukan Timor-Leste oleh Indonesia. Difilmkan oleh media asing yang hadir untuk kunjungan delegasi Parlemen Portugis, serangkaian gambar pembunuhan massal berdarah dingin terhadap anak-anak muda memobilisasi sebuah era baru gerakan solidaritas internasional sehingga tidak mungkin lagi bagi berbagai pemerintah untuk mengabaikan penindasan di Timor-Leste. Film ini juga menunjukkan ketidaksenangan generasi muda Timor-Leste terhadap rezim Indonesia, yang mengklaim telah berhasil merebut hati dan pikiran mereka.

472. Xanana Gusmão tertangkap pada November 1992. Setelah diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dia tetap memimpin Resistansi dari Penjara Cipinang di Jakarta. Resistansi memperlebar langkah-langkah diplomatik berdasarkan pada keinginan tanpa syarat untuk berdialog dengan Indonesia. Rencana Damai CNRM dilancarkan pada 1993 untuk mendorong usaha ini. Xanana Gusmão semakin diterima oleh masyarakat internasional sebagai figur penting dalam pencarian solusi damai. Setelah Santa Cruz, dialog tripartit yang disponsori PBB antara Portugal dan Indonesia dihidupkan kembali.

473. Selama 1990-an, gerakan mahasiswa di Timor-Leste dan Indonesia menguat dan menjadi amat penting bagi perjuangan kemerdekaan. Di Timor-Leste, para aktivis masih mengalami penindasan, namun berjuang agar suara mereka didengar. Di Indonesia, para mahasiswa Timor-Leste membangun hubungan baik dengan para aktivis hak asasi manusia dan prodemokrasi Indonesia dan melakukan sejumlah kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang perjuangan penentuan nasib sendiri yang sedang berlanjut.

474. Pada Oktober 1996, Komite Nobel mengumumkan penganugerahan Hadiah Perdamaian bagi Uskup Belo dan José Ramos-Horta, yang terbukti menjadi suntikan semangat bagi perjuangan penentuan nasib sendiri. Kofi Annan mulai menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada Januari 1997, dan membawa pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah Timor-Leste.

Pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991

475. Pembantaian pemuda Timor-Leste di pemakaman Santa Cruz oleh para serdadu Indonesia pada 12 November 1991 merupakan titik balik dalam perjuangan rakyat

Timor untuk diakui secara internasional. Untuk pertama kali sejak invasi 1975, kebrutalan militer Indonesia terhadap warga sipil terekam dalam film oleh media internasional. Film yang diselundupkan keluar dari wilayah tersebut beberapa hari setelah pembantaian awal, ditayangkan oleh berbagai televisi di seluruh dunia dan menyingkap keadaan sebenarnya tentang pendudukan Indonesia yang selama itu dicoba disembunyikan oleh Jakarta. Penindasan yang keras oleh militer Indonesia terhadap rakyat Timor-Leste biasa ini tidak lagi bisa disangkal.

476. Komisi mendengarkan dari mantan pejabat senior PBB Francisc Vendrell tentang dampak kejadian ini di PBB:

*Insiden Santa Cruz adalah kejadian bersejarah yang penting bagi Timor-Leste dan mengangkat kembali seluruh masalah Timor-Leste ke kancah politik di PBB. Untuk itu kita sebaiknya menganggap mereka yang meninggal di Pemakaman Santa Cruz sebagai pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan Timor-Leste.*⁶³³

477. Kejadian di pemakaman Santa Cruz pada 12 November 1991, dan hari-hari sesudahnya dicakup dalam bab-bab khusus dalam laporan ini. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan ; dan Bab 7.7: Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual). José Ramos-Horta menceritakan kepada Komisi bahwa film yang diambil oleh Max Stahl tentang kejadian ini adalah bukti kunci, dan setelah itu orang tidak dapat lagi menuduhnya mengarang-ngarang cerita mengenai penindasan terhadap rakyat Timor-Leste yang berusaha mengekspresikan harapan mereka untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan.⁶³⁴

478. Beberapa minggu sebelum terjadinya pembantaian, para aktivis di Timor-Leste tengah mempersiapkan diri untuk kunjungan delegasi parlemen Portugis.⁶³⁵ Terdapat desas-desus tentang rencana pertemuan antara delegasi tersebut dengan Xanana Gusmão, dan harapan sangat tinggi. Gerakan klandestin mempersiapkan demonstrasi. Satu kelompok pemuda menulis berbagai spanduk di halaman Gereja Motael di Pantai Dili. Kelompok ini dipantau oleh intelijen Indonesia dan keributan dengan militer Indonesia terjadi pada 28 Oktober dan salah seorang anggotanya, Sebastião Gomes, ditembak mati. Walaupun kunjungan delegasi Portugis dibatalkan, pada 11 November Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan, Pieter Kooijmans berada di Dili. Gerakan klandestin memutuskan untuk tetap mengadakan demonstrasi untuk mengenang pembunuhan Sebastião Gomes setelah misa pemakaman di Gereja Motael pada pagi hari 12 November 1991. Ada upaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar demonstrasi tersebut berlangsung damai dan tertib.⁶³⁶

479. Tentara, polisi, dan agen intelijen Indonesia berjaga di sepanjang jalan-jalan kota Dili selama demonstrasi dari Gereja Motael tersebut, sepanjang pantai, dan terus ke selatan ke pemakaman Santa Cruz. Sebagian demonstran berjalan dari Motael, sementara sebagian bergabung di tengah perjalanan dan lebih banyak lagi yang bergabung di pemakaman. Kemudian spanduk dikibarkan yang mengimbau

keterlibatan PBB di Timor-Leste, mendukung Xanana Gusmão dan penentuan nasib sendiri. Keadaan sangat menegangkan, karena keterbukaan seperti ini tidak diperkirakan sebelumnya. Ada berbagai kesaksian, namun yang jelas dalam perjalanan seorang tentara Indonesia ditusuk dan dibawa dalam keadaan cedera. Pernyataan resmi Indonesia tentang kejadian tersebut menjelaskan bahwa hal tersebut memprovokasi kemarahan militer dan berlanjut dengan pembantaian. Tapi, bukti tidak mendukung kesimpulan tersebut. Penembakan dimulai ketika para demonstran tiba di pemakaman Santa Cruz. Tentara menembaki dengan senjata-senjata otomatis ke arah para peserta demonstrasi damai dan tidak bersenjata, yang banyak di antaranya lari ke kompleks pemakaman tersebut. Komisi mendengar kesaksian bahwa para tentara kemudian mengepung pemakaman Santa Cruz, lalu masuk dan membunuh orang-orang, yang tadinya tidak terluka atau hanya terluka ringan, dengan menusuk mereka dengan pisau bayonet.⁶³⁷ Simplicio Celestino de Deus, seorang yang berhasil selamat dari pembantaian tersebut, mengatakan kepada Komisi:

*Banyak yang terbunuh di dalam pemakaman tapi lebih banyak lagi yang terbunuh di luar pemakaman ketika mereka sedang berlari atau diambil dari tempat persembunyiannya di rumah-rumah dan tempat lain, lalu dibunuh.*⁶³⁸

480. Banyak pemuda yang diangkut menggunakan truk, ke rumah sakit militer Wira Husada di Lahane, Dili, ke pusat-pusat interogasi, atau dibunuh begitu saja. Ratusan pemuda lari ke kediaman Uskup Belo mencari perlindungan. Uskup Belo menghubungi Gubernur Mario Carrascalão, dan pergi ke Santa Cruz, tempat dia melihat sejumlah tubuh orang yang terbunuh dan terluka, dan kemudian mengunjungi rumah sakit Wira Husada tempat dia melihat hasil pemukulan yang parah.⁶³⁹ Komisi mendengarkan kesaksian yang menyebut tentang serangkaian pembunuhan dalam hari-hari sesudahnya, ketika pasukan keamanan Indonesia memburu orang-orang yang mereka curigai terlibat dalam unjuk rasa tersebut.⁶⁴⁰ Komisi juga mendengar tentang orang-orang hilang yang belum ditemukan, dan tentang kekerasan seksual terhadap para perempuan muda di Santa Cruz.⁶⁴¹

481. Setelah pembantaian Santa Cruz, Renetil (*Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste*) dan Felectil (*Frente Estudantil Clandestina de Timor-Leste*) melakukan demonstrasi di depan kantor perwakilan PBB di Jakarta.⁶⁴²

482. Dalam beberapa hari dan bulan berikutnya, ratusan orang ditahan. Yang saat ini menjadi Kantor Nasional Komisi di Balide ketika itu digunakan untuk menahan banyak orang, dan ruangan yang digunakan sekarang telah diberi nama 'ruangan Santa Cruz' untuk mengenang kejadian tersebut. Sebagian orang diadili dan dijatuhi hukuman penjara untuk waktu yang lama.⁶⁴³ Komisi mendengarkan kesaksian dari pengacara Indonesia Luhut Pangaribuan dan aktivis Ade Rostina Sitompul, yang berkunjung ke Dili setelah pembantaian tersebut, tentang berbagai usaha dari para pengacara hak asasi manusia Indonesia untuk membela para tahanan dan tentang ketidakadilan proses tersebut.⁶⁴⁴

483. Perkiraan independen menyebut jumlah orang yang terbunuh mencapai 271 orang, dan 250 orang dinyatakan hilang.⁶⁴⁵ Ratusan orang ditangkap dan ditahan sehubungan dengan kejadian tersebut. Penyelidikan oleh pihak Indonesia (Komisi Penyelidikan Nasional, KPN) yang ditugaskan untuk menyelidiki pembantaian tersebut gagal memenuhi harapan. Pada awalnya mereka menyebut bahwa 19 orang terbunuh di Santa Cruz, namun dihadapkan dengan kecaman internasional terhadap upaya menutup-nutupi tersebut, angkanya naik menjadi 50. Bukti lebih jauh bahwa kepemimpinan senior ABRI memaklumi pembantaian tersebut terjadi pada 14 November ketika Panglima ABRI Try Sutrisno dikutip mengatakan kepada para lulusan AKABRI bahwa:

Penjahat-penjahat seperti ini harus ditembak, dan kita akan menembak mereka.⁶⁴⁶

484. Komisi melakukan survei di lingkungan di Dili dan secara umum mencatat informasi mengenai pembantaian Santa Cruz melalui proses pengambilan pernyataan. Melalui proses ini, Komisi juga menerima kesaksian tentang pembunuhan dan penghilangan lebih lanjut oleh militer Indonesia terhadap mereka yang dicurigai terlibat demonstrasi, termasuk di distrik-distrik. Misalnya, di Sorolau (Ainaro, Ainaro) empat aktivis klandestin dibunuh oleh tentara yang diidentifikasi sebagai anggota Kopassus dan Milsas Timor.⁶⁴⁷ Atas dasar penelitian ini, meski Komisi tidak bisa menentukan secara tepat berapa orang yang masih hilang, Komisi yakin bahwa angka 200 bukan perkiraan yang mengada-ada. Komisi mencatat dalam audiensinya serta kegiatan lainnya bahwa pembantaian Santa Cruz masih merupakan persoalan yang tidak terpecahkan yang sangat penting bagi banyak orang dan keluarga, dan bagi negara ini secara keseluruhan, dan yakin bahwa penyelidikan yang lebih menyeluruh perlu dilakukan (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

Dampak internasional Santa Cruz

485. Berita pembantaian Santa Cruz menyebar ke seluruh dunia dengan cepat, dan berakibat pada meningkatnya aksi solidaritas secara dramatis. Banyak wartawan asing dan pekerja LSM berkunjung ke Timor-Leste mengharapkan kedatangan misi Portugis. Sejumlah orang tersebut telah menyaksikan pembantaian itu dan berperan penting memberitahu dunia pada beberapa bulan dan tahun berikutnya, termasuk memberi kesaksian pada Komisi Hak Asasi Manusia PBB. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi bahwa pembantaian tersebut telah memicu Portugal, tempat terjadi serangkaian protes massal dan seruan untuk tindakan PBB. (Lihat Bab 7.1: Hak penentuan nasib sendiri, bagian 'masyarakat sipil'.)

486. Beberapa negara, khususnya Australia, berusaha mendukung penjelasan pihak Indonesia bahwa ini adalah tindakan yang tidak biasa oleh "oknum" dalam militer Indonesia. Meskipun begitu, pembantaian tersebut dan fokus pada masalah lebih luas tentang pendudukan Indonesia atas Timor-Leste yang dihasilkannya menjadi bencana relasi publik bagi Indonesia. 12 November menjadi tema perjuangan bagi

diaspora Timor dan para aktivis hak asasi manusia di berbagai negara di seluruh dunia hingga 1999, dengan peringatan tahunan yang ditandai dengan berbagai demonstrasi dan hening cipta.*

Penangkapan Xanana Gusmão

487. Xanana Gusmão ditangkap oleh militer Indonesia pada 20 November 1992 di sebuah rumah di Lahane, Dili.† Berita tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh Timor-Leste dan dunia. Pada awalnya ia dibawa ke Bali, dan kekhawatiran pertama para pendukung adalah keselamatan fisiknya. Di Dili, orang-orang yang diduga melindungi Xanana Gusmão ditahan dan disiksa dengan kejam.⁶⁴⁸ Sebuah kampanye internasional untuk menekan Indonesia agar menjamin keselamatannya mulai dijalankan. Xanana Gusmão ditampilkan dalam sebuah wawancara televisi Indonesia pada 25 November, di mana ia sepertinya menyatakan menolak perjuangan Resistansi. Ia dibawa kembali ke Dili untuk diadili pada Mei 1993, dan pada 17 Mei, dia berdiri untuk membacakan pembelaannya. Hakim pengadilan menghentikannya hanya selang beberapa menit setelah ia mulai membacakan pembelaannya, dengan menyatakan bahwa pembelaannya “tidak relevan”. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dibawa ke penjara Cipinang di Jakarta yang dijaga ketat (lihat Bab 7.6.: Pengadilan politik). Namun, pembelaan Xanana Gusmão sepanjang dua puluh tujuh halaman diselundupkan ke luar negeri dan disebarluaskan ke dunia internasional. Ia menolak klaim Indonesia atas Timor-Leste dan mengulangi seruan perjuangan penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste.

488. Penangkapan Xanana Gusmão merupakan pukulan telak bagi pihak Resistansi, dan penguasa Indonesia yakin bahwa itu akan menjadi akhir dari perjuangan kemerdekaan. Tapi, hal tersebut justru menciptakan kondisi bagi dia untuk tampil sebagai seorang pemimpin terhormat dunia, setelah 17 tahun di pegunungan dan hutan-hutan Timor-Leste, sementara ia terus memimpin Resistansi dari sel penjaranya. Xanana Gusmão mengatakan kepada Komisi bahwa ia banyak belajar selama di penjara Cipinang, tempat ia ditahan bersama dengan para tahanan politik Indonesia dari seluruh pelosok Indonesia. Dia memberitahu Komisi bahwa pengalaman tersebut memberinya:

Kesempatan untuk meraih pengetahuan lebih baik tentang perjuangan rakyat Indonesia untuk demokrasi dan kebebasan. Ini membantu saya untuk mengurangi dan kemudian menghilangkan rasa benci yang terakumulasi di hutan selama 17 tahun. Saya menjadi mengerti persamaan objektif yang menyatukan kita dengan rakyat Indonesia... Pengertian ini memungkinkan saya bahkan untuk berbicara dengan bekas-bekas musuh dan jenderal-jenderal Indonesia.⁶⁴⁹

* Pada 9 April 2005, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Kepala Negara pertama yang mengunjungi Perkuburan Santa Cruz, dalam rangka penghargaan dan rekonsiliasi.

† Xanana Gusmão ditangkap di rumah Aliança Araújo. Selama bertahun-tahun secara sembunyi-sembunyi ia pergi ke Dili untuk melakukan berbagai pertemuan dalam banyak kesempatan.

Jaringan klandestin pelajar

Klandestin di Timor-Leste dan kebangkitan kekuatan paramiliter

489. Selama 1990-an, gerakan klandestin pemuda perkotaan berkembang, dan mengambil risiko besar untuk menyampaikan informasi dan melakukan berbagai demonstrasi ketika para tamu luar negeri datang ke Timor-Leste. Aparat keamanan Indonesia melanjutkan pendekatan tangan-besinya terhadap resistansi pemuda, dan pada 1990-an mengubah strateginya dalam usaha memerangi gerakan yang terus tumbuh ini. Mulai pertengahan dasawarsa 1990-an, perhatian baru diarahkan kepada operasi paramiliter dan intelijen di wilayah ini. Kelompok-kelompok bersenjata yang kemudian dikenal sebagai pasukan “Ninja” merajalela di jalanan Dili pada malam hari, menciptakan suasana ketakutan di kalangan penduduk karena banyak orang yang hilang dalam operasi-operasi rahasia ini.⁶⁵⁰ Polisi anti huru-hara, Brimob, tampak hadir di mana-mana dan sangat mengancam, khususnya di Dili tempat demonstrasi mahasiswa sering terjadi.

490. Selama tahun-tahun tersebut terdapat banyak titik-titik rawan yang dapat menimbulkan konfrontasi antara pemuda Timor-Leste dengan pasukan keamanan Indonesia. Agama kadang digunakan untuk memprovokasi kekerasan. Di Remexio (Aileu) pada Juni 1994, seorang serdadu Indonesia datang ke sebuah misa dan menghina Ekaristi. Dua minggu kemudian di Universitas Timor-Timur (UNTIM), ratusan mahasiswa berunjuk rasa, menuntut kemerdekaan.⁶⁵¹ Persaingan antara warga asli Timor-Leste dan pendatang dari Indonesia dapat menyebabkan bentrokan penuh kekerasan. Di Baucau pada Januari 1995, ketegangan antara pendatang dari Sulawesi dengan orang-orang lokal meledak di pasar pusat. Dalam usaha menghentikan kerusuhan tersebut, militer Indonesia menembaki beberapa orang, dan belakangan mengakui bahwa tiga orang tewas.⁶⁵² Beberapa hari kemudian, pada 9 Januari 1995, para mahasiswa di UNTIM menandai hari dialog tripartit di Jenewa dengan sebuah unjuk rasa yang menuntut dibebaskannya Xanana Gusmão dan agar PBB menerapkan resolusi-resolusinya tentang Timor-Leste. Orang-orang asing yang berkunjung menyaksikan demonstrasi ini dan penumpasan yang menyusul kemudian, di mana enam belas orang demonstran ditahan dan disiksa.⁶⁵³

Gerakan mahasiswa di Indonesia

491. Hubungan antara kaum nasionalis Timor-Leste dengan para aktivis hak asasi manusia Indonesia mulai terjalin pada dasawarsa 1980-an ketika para tahanan politik Timor ditahan di berbagai penjara di Jawa.⁶⁵⁴ Organisasi-organisasi mahasiswa Renetil dan Impettu (Ikatan Mahasiswa, Pemuda, dan Pelajar Timor-Leste), memainkan peran yang semakin penting pada dasawarsa 1990-an dalam mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ini. Awalnya, para aktivis mahasiswa Timor-Leste menjadi terlibat di gerakan-gerakan protes Indonesia tentang sejumlah masalah seperti Waduk Kedungombo dan persengketaan tanah di

Jawa Tengah pada 1990. Aktivis hak asasi manusia Indonesia Nugroho Katjasungkana menceritakan kepada Komisi mengenai kesibukan para aktivis Indonesia untuk menjatuhkan rezim Soeharto yang korup dan tidak adil pada dasawarsa 1980-an. Dia mengingat keterlibatan orang Timor-Leste dalam tindakan-tindakan ini, dengan mencatat bahwa:

*Keterlibatan orang Timor dalam perjuangan demokrasi di Indonesia mendahului keterlibatan orang Indonesia dalam perjuangan penentuan nasib sendiri Timor-Leste.*⁶⁵⁵

492. Renetil mengembangkan strategi yang disebutnya 'Indonesianisasi' konflik tersebut.⁶⁵⁶ Para mahasiswa Timor-Leste menjadi aktif dalam gerakan prodemokrasi Indonesia yang mulai tumbuh,⁶⁵⁷ dan bendera Timor sering terlihat dalam berbagai demonstrasi yang menyuarakan perubahan di Indonesia pada 1990-an.⁶⁵⁸ Sejumlah kelompok Indonesia, yang sebelumnya sibuk dengan agenda prodemokrasinya sendiri dan tidak sadar akan situasi di Timor-Leste, perlahan mulai mengidentifikasi masalah Timor-Leste dengan akar permasalahan mereka sendiri, yakni rezim Orde Baru Soeharto.⁶⁵⁹

493. Kelompok-kelompok Indonesia yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste dibentuk di sejumlah kota di seluruh Jawa, khususnya setelah pembantaian Santa Cruz.⁶⁶⁰ Di Jakarta pada 1991, beberapa LSM membentuk Komisi Gabungan Pembela Timor-Leste, yang pada 1998 digantikan oleh Fortilos (Forum Solidaritas Rakyat Timor Lorosae). Pada 1995 di Jakarta, SPRIM (Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere) dibentuk dan kemudian pada 1997 Solidamor (Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor-Leste) dibentuk. Di Kupang pada 1998, para aktivis mahasiswa dan LSM membentuk Forsolidareste (Forum Solidaritas Timor-Leste). Para aktivis Indonesia dan banyak aktivis Timor menghubungkan demokratisasi Indonesia sebagai prakondisi bagi penentuan nasib sendiri Timor-Leste. Wilson B. Nurtias dari kelompok solidaritas Indonesia SPRIM mengatakan bahwa rakyat Indonesia dan Timor-Leste adalah "penumpang dari sebuah kapal, yang sedang menghadapi bajaklaut yang sama."⁶⁶¹

494. Pada pertengahan dasawarsa 1990-an para mahasiswa Timor-Leste menggunakan taktik yang menjadikan sejumlah kedutaan asing di Indonesia sebagai benteng. Sudah sejak 1989, para pemuda Timor mencari suaka politik di berbagai kedutaan di Jakarta karena takut terhadap kekerasan oleh pasukan keamanan Indonesia.⁶⁶² Pada 1990-an, taktik tersebut digunakan sebagai bagian dari strategi untuk mendapatkan perhatian media tentang perjuangan yang tengah berlangsung untuk menginternasionalkan masalah penentuan nasib sendiri. Yang paling spektakuler yang kemudian dikenal sebagai 'aksi lompat pagar' terjadi pada 1994, pada saat KTT para pemimpin regional Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Saat pertemuan APEC dilangsungkan di Bogor, dekat Jakarta, dan media

* Berbagai universitas terkemuka menjadi basis gerakan kelompok prodemokrasi termasuk FKMI, (Forum Komunikasi Mahasiswa Jember), SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), dan KPRP (Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan).

dunia sedang berkumpul untuk meliput peristiwa tersebut, 29 orang Timor-Leste melompati pagar Kedutaan AS di Jakarta pada 12 November dan menuntut untuk bertemu dengan Presiden Bill Clinton yang tengah berkunjung. Selama sehari-hari para mahasiswa Timor-Leste yang terkepung tampil di berbagai halaman depan media masa, di Jakarta dan seluruh dunia, dengan tuntutan pembebasan Xanana Gusmão dan penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste. Meskipun mereka tidak bertemu dengan Presiden Clinton, negosiasi berhasil dilakukan dan mereka diberi suaka politik ke Portugal. Ini adalah sebuah prestasi hubungan publik hebat yang diatur oleh Renetil.⁶⁶³

495. Aksi lompat pagar di kedutaan lain terjadi di tahun-tahun berikutnya, hingga sejumlah kedutaan di Jakarta mengambil berbagai langkah pengamanan untuk mencegah para mahasiswa Timor-Leste memasuki tempat mereka. Pada November 1995, lima orang memasuki Kedutaan Prancis dan diberi suaka di Portugal.⁶⁶⁴ Dan pada 7 Desember 1995, sejumlah pemuda melompat pagar kedutaan Belanda dan Rusia untuk menarik perhatian kepada hari peringatan invasi Indonesia ke Timor-Leste.⁶⁶⁵ Sejumlah wawancara yang dilakukan oleh Komisi menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari strategi yang dikoordinasikan dengan baik oleh Renetil, yang beroperasi dengan hubungan langsung dengan kepemimpinan Xanana Gusmão di penjara Cipinang.⁶⁶⁶

496. Selama dasawarsa 1990-an, para anggota Renetil bergerak untuk menguasai posisi strategis di organisasi mahasiswa yang diakui Negara, Impettu, yang keanggotaannya adalah wajib bagi semua mahasiswa Timor-Leste. Hal ini memungkinkan para anggota Renetil untuk berorganisasi secara terbuka sebagai anggota Impettu dan pada pertengahan 1990-an para anggota Renetil secara efektif telah menguasai Impettu.⁶⁶⁷ Seiring makin besarnya suara yang mengimbau perubahan rezim menjelang akhir dasawarsa 1990-an, cabang-cabang Impettu bersatu dalam sebuah kepemimpinan tunggal, yakni DPP Impettu (Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa, Pemuda, dan Pelajar Timor-Leste), yang dikepalai oleh Wakil Sekretaris Jenderal Renetil.⁶⁶⁸

Rencana Damai CNRM dan inisiatif diplomatik

497. Pada awal 1990-an CNRM secara aktif berusaha berdialog dengan Indonesia. Dengan dukungan LSM internasional dan berbagai kelompok masyarakat sipil, Kampanye Dialog Timor dilancarkan (lihat Bab 7.1.: Hak penentuan nasib sendiri). Pada 1993, CNRM menawarkan rencana tiga-tahap untuk perdamaian, yang pada dasarnya adalah demiliterisasi Timor-Leste, sebuah periode otonomi transisional, dan pada akhirnya sebuah tindakan penentuan nasib sendiri untuk menentukan status politik permanen wilayah tersebut. Mereka mengajukan Rencana Damai tersebut pertama ke Uni Eropa dan kemudian ke PBB, dan menunjukkan peningkatan signifikan dukungan aktif oleh Portugal. Pemerintah Indonesia menolak rencana tersebut. Meskipun demikian rencana tersebut tetap ditawarkan selama dasawarsa 1990-an sebagai fokus upaya diplomatik CNRM dan tanda keinginan mereka untuk mencari solusi melalui dialog.⁶⁶⁹ Sementara itu Portugal memulai lagi pembicaraan

dengan Indonesia pada 1992, setelah menghentikan hubungan pascapembantaian Santa Cruz pada 1991.

498. José Ramos-Horta melanjutkan kampanye diplomatiknya berdasarkan rencana perdamaian ini. Saat Indonesia berada di bawah tekanan yang meningkat menyusul terungkapnya Pembantaian Santa Cruz, dan sebagian kalangan internasional merasa berkepentingan untuk mencapai solusi bagi Timor-Leste, Indonesia tetap berada dalam posisi yang relatif kuat pada awal 1990-an. Portugal dan Indonesia melanjutkan kembali pembicaraan tripartit di bawah dukungan Sekjen PBB. Tapi, Komisi mendengar dari mantan Pejabat Senior PBB Francesc Vendrell bahwa tahun-tahun awal dan pertengahan dasawarsa 1990-an ini adalah masa saat Ramos-Horta harus berjuang keras untuk menghindari solusi diplomatik yang buruk bagi Timor-Leste.⁶⁷⁰ Dengan dukungan orang-orang Timor-Leste di luar negeri dan gerakan solidaritas internasional yang makin luas, ia bekerja keras untuk meningkatkan profil internasional pemimpin CNRM, Xanana Gusmão, dan untuk meyakinkan para pemimpin dunia bahwa solusi politik itu mungkin.

Kasus pengadilan internasional: Portugal vs Australia, 1991 - 1995

499. Pada 1991, Portugal mengajukan Australia ke Mahkamah Internasional sehubungan dengan perjanjian Celah Timor yang ditandatangani dengan Indonesia pada 1989. Portugal tidak bisa mengajukan Indonesia ke pengadilan ini, karena Indonesia belum mengakui yurisdiksi Mahkamah tersebut. Keputusannya diumumkan pada 1995, dan meskipun perjanjian tersebut tidak berhasil dibatalkan, kasus tersebut memberikan pernyataan penting dalam mendukung hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri yang tengah diperjuangkan.⁶⁷¹

500. Portugal berargumen bahwa Australia telah melanggar hukum internasional dengan membuat perjanjian bersama Indonesia untuk membagi kekayaan alam milik rakyat Timor-Leste. Portugal berkata bahwa hal tersebut melanggar haknya sebagai penguasa pemerintahan dari wilayah yang tak berpemerintahan sendiri tersebut, dan juga hak rakyat Timor-Leste.

501. Karena masalah teknis hukum, sebagian besar hakim mengatakan bahwa mereka tidak bisa mempertimbangkan kasus tersebut. Semua pemasalahan dalam kasus tersebut berkisar seputar legalitas tindakan yang telah dan terus dilakukan Indonesia di Timor-Leste, sehingga mereka berkata bahwa mereka tidak dapat mempertimbangkan kasus tersebut jika Indonesia bukan merupakan salah satu pihak. Tapi, dua orang hakim tidak setuju dengan pandangan ini dan mereka secara tegas memberi pendapat berbeda. Mereka mempertimbangkan pentingnya kasus tersebut dan memberikan berbagai temuan penting tentang kewajiban Negara-negara dalam hubungannya dengan hak penentuan nasib sendiri dalam konteks Timor-Leste. Hakim Weeramantry dan Hakim Skubiszewski keduanya mengakui hak atas penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Mereka juga memperingatkan bahwa Negara-negara yang ikut dalam perjanjian seperti itu memiliki kewajiban untuk

berkonsultasi dengan rakyat Timor-Leste dan kekuasaan pemerintahan yang sah (Hakim Skubiszewski), dan bahwa perjanjian seperti itu mungkin telah melanggar berbagai kewajiban yang dilimpahkan kepada mereka oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional (Hakim Weeramantry).⁶⁷²

Hadiah Nobel Perdamaian, 1996

502. Penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian 1996 bagi Uskup Belo dan José Ramos-Horta adalah momen pendorong baru bagi perjuangan rakyat Timor-Leste untuk diakui secara internasional. Penghargaan tersebut memberi pengakuan bagi perjuangan kedua orang tersebut, yang pengalamannya selama masa pendudukan Indonesia sangat berbeda tetapi visi tentang identitas rakyat Timor dan harga diri manusia tetap sama. Penghargaan tersebut juga menandingi usaha bertahun-tahun yang dilakukan penguasa Indonesia untuk mengecilkan kredibilitas kedua orang tersebut, dan membuka pintu para pemimpin dunia kepada mereka dan perjuangan Timor-Leste.

503. Pidato penganugerahan 1996 membicarakan tentang konflik tersebut:

Konflik di Timor-Leste telah disebut sebagai “konflik yang terlupakan”. ... Jarang sekali sinisme politik dunia didemonstrasikan lebih jelas dari ini. ... Dua orang penerima Hadiah Perdamaian tahun ini, Carlos Felipe Ximenes Belo dan José Ramos-Horta, telah bekerja tanpa lelah, dan dengan pengorbanan pribadi yang besar, bagi rakyat mereka yang tertindas. Dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit, mereka telah mempertahankan rasa kemanusiaan dan kepercayaan mereka akan masa depan.⁶⁷³

504. Dalam pidato penerimaannya, Uskup Belo membicarakan mengenai harapannya bahwa hadiah tersebut dapat memajukan perjuangan Timor-Leste:

Saya sangat percaya bahwa saya berada di sini dasarnya sebagai suara dari rakyat Timor-Leste yang tidak bersuara, yang spiritnya bersama saya hari ini, jika tidak secara langsung. Dan apa yang diinginkan rakyat adalah perdamaian, diakhirinya kekerasan, dan dihormatinya hak asasi mereka. Adalah harapan saya yang paling besar bahwa Hadiah Nobel untuk perdamaian tahun 1996 ini dapat membantu mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁶⁷⁴

505. Dengan Anugerah Nobel Perdamaian yang diterimanya, José Ramos-Horta memulai kampanye diplomatik yang ambisius. Pada awal 1997, ia berkunjung ke Afrika Selatan. Pada Juli tahun itu, ketika Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela bertemu dengan Presiden Soeharto di Jakarta, ia meminta bertemu dengan Xanana Gusmão yang sedang dipenjarakan. Presiden Soeharto awalnya menolak permintaan tersebut, dengan mengatakan bahwa Xanana Gusmão hanyalah seorang kriminal. Ketika Presiden Afrika Selatan mengingatkan Soeharto bahwa orang lain pun dulu

berkata begitu tentangnya, Soeharto kemudian memperbolehkan. Berita tentang pertemuan pribadi tersebut sampai ke tangan pers dunia, dan meningkatkan profil Xanana Gusmão sebagai seorang negarawan untuk perdamaian.

506. Di Timor-Leste, Anugerah Nobel Perdamaian tersebut menunjukkan kepada rakyat Timor bahwa mereka tidak dilupakan oleh masyarakat internasional, dan meningkatkan harapan untuk bantuan internasional dalam pencarian solusi bagi konflik tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa

507. Di pertengahan dasawarsa 1990-an terjadi perubahan personalia yang bertanggung jawab atas masalah Timor-Leste di markas PBB New York. Francesc Vendrell pertama-tama menjadi Direktur untuk Asia Tenggara dan Pasifik dan kemudian Asia dan Pasifik. Pejabat yang bertanggung jawab atas urusan Timor-Leste adalah Tamrat Samuel. Vendrell dan Samuel terus menjadi Pejabat Sekretariat Utama yang menangani Timor-Leste sampai Jajak Pendapat 1999. Francesc Vendrell mengatakan kepada Komisi tentang dilanjutkannya dialog tripartit dan tentang usaha-usaha dia dan Samuel untuk melibatkan Timor-Leste dalam diskusi tentang masa depan kawasan tersebut.⁶⁷⁵ Pada Januari 1994, Samuel bertemu dengan Xanana Gusmão di penjara Cipinang, begitupun Vendrell pada Desember tahun itu. Pada 1994, mereka juga berkunjung ke Timor-Leste untuk bertemu langsung dengan orang-orang Timor dari semua latar belakang politik, juga dengan para pendeta dan biarawati Katolik. Dia mengenang:

Salah satu hal yang sangat menggugah saya adalah besarnya kepercayaan semua orang pada PBB. ... perasaan tanggung jawab yang menurut saya dirasakan oleh saya dan Tamrat, bahwa kami harus melakukan yang terbaik atas nama rakyat yang hanya dapat mengandalkan dukungan PBB.⁶⁷⁶

508. Vendrell mengatakan kepada Komisi tentang kesulitan PBB ketika rakyat Timor-Leste sendiri berada di luar proses diskusi dialog tripartit itu. Kendala ini memicu inisiatif bagi pembentukan Dialog Menyeluruh Antar-Timor (All-Inclusive intra-East Timorese Dialogue, AIETD). Gagasannya, seperti yang dijelaskan Vendrell pada Komisi, adalah:

[Jika] mereka [rakyat Timor-Leste] bersatu dan mereka dibiarkan sendiri, mereka mungkin saja menyadari bahwa mereka memiliki banyak persamaan dan mungkin mencapai sebuah usulan bersama tentang Timor-Leste.⁶⁷⁷

509. Indonesia menyetujui mekanisme ini, meskipun Indonesia bersikeras bahwa AIETD tidak diperbolehkan untuk membahas status politik Timor-Leste. AIETD yang pertama diadakan di Austria pada Juni 1995, dengan peserta dari semua latar belakang politik. Uskup Belo juga menghadiri pertemuan tersebut, meskipun

Xanana Gusmão tetap berada di penjara di Jakarta. Tiga pertemuan AIETD setelah itu diadakan, pada Maret 1996, Oktober 1997, dan Oktober 1998. Meskipun berbagai pertemuan tersebut tidak menghasilkan rencana praktis ataupun hasil-hasil resmi, tapi untuk pertama kalinya sejak 1975, PBB terlibat dalam menyatukan rakyat Timor-Leste dari semua latar belakang untuk bersama-sama membahas berbagai perbedaan mereka dan mencari landasan yang sama.

510. Kofi Annan mulai menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada Januari 1997, dan membawa serta fokus baru bagi masalah Timor-Leste. Pada Februari 1997, dia mengangkat diplomat Pakistan Duta Besar Jamsheed Marker sebagai Utusan Pribadinya untuk Timor (PRSG). Ini sangat memperkuat kerja Francisc Vendrell dan Tamrat Samuel di Sekretariat PBB, dan tim ini mengunjungi Portugal, Indonesia, dan Timor-Leste pada masa yang makin bergolak antara 1997 sampai 1998.

Dari Reformasi ke pengumuman tentang Jajak Pendapat

Tinjauan

511. Berbagai peristiwa 1997 bergerak dengan cepat. Krisis finansial Asia melanda Indonesia pada akhir 1997. Krisis ini menguak korupsi dan kebobrokan yang mewabah dalam rezim Soeharto. Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia diguncang oleh berbagai demonstrasi rakyat yang menuntut turunnya Soeharto dan reformasi besar-besaran yang dikenal sebagai Reformasi. Para mahasiswa Timor memainkan peran aktif dalam berbagai demonstrasi ini. Pada 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri, dan Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih tugas sebagai Presiden.

512. Sementara itu, aktivitas diplomatik sangat sibuk sejak Hadiah Nobel 1996, dan Xanana Gusmão menerima kunjungan para tamu yang mewakili para pemimpin dunia dan sejumlah organisasi penting secara reguler di sel penjaranya di Jakarta. Pihak Resistansi melakukan reorganisasi dan menyelenggarakan konferensi penting di Peniche pada April 1998 di mana CNRM diubah menjadi *Conselho Nacional da Resistência Timorese* (Dewan Nasional Resistensi Rakyat Timor, CNRT). Ini dimaksud untuk memperluas basis gerakan kemerdekaan.

513. Di Timor-Leste, suasana Reformasi, dan melonggarnya kontrol militer membuka jalan untuk diskusi terbuka tentang status politik wilayah tersebut untuk pertama kalinya dalam masa pendudukan Indonesia. Tuntutan referendum untuk membiarkan rakyat Timor-Leste menentukan nasib mereka meraih momentum di paruh kedua 1998. Tapi, pada akhir tahun tersebut militer Indonesia telah melakukan reposisi. Penarikan pasukan ternyata hanya tipuan, dan pada akhir 1998 semakin banyak bukti yang menunjukkan strategi TNI untuk membentuk, mempersenjatai, dan mendanai para milisi prointegrasi di seluruh negeri untuk mencegah segala upaya benar-benar untuk penentuan nasib sendiri.

514. Dengan penggantian Soeharto, PBB dan masyarakat internasional meningkatkan tekanannya pada Indonesia untuk mencapai solusi untuk masalah Timor-Leste. Diskusi antara Portugal dan Indonesia awalnya berkisar seputar paket otonomi khusus bagi Timor-Leste, dengan pandangan berbeda-beda apakah ini merupakan sebuah solusi atau hanya satu tahap dalam sebuah proses penentuan nasib sendiri. Pada Januari 1999, Presiden B.J. Habibie mengejutkan banyak orang dalam pemerintahannya sendiri ketika dia menyatakan bahwa Indonesia akan memperbolehkan rakyat Timor-Leste untuk menentukan sendiri masa depan mereka, termasuk kemerdekaan jika itu memang adalah kehendak mereka. Negosiasi antara Portugal dan Indonesia diarahkan untuk merampungkan mekanisme untuk melaksanakan pilihan ini.

515. Pada bulan-bulan awal 1999, ketika negosiasi-negosiasi tengah berlangsung, strategi TNI mengembangkan milisi bersenjata dipercepat. Situasi politik yang relatif terbuka pada pertengahan 1998 telah hilang, dan kekerasan selalu menjadi ancaman terhadap para pendukung prokemerdekaan. Pembantaian di Dili dan Liquiçá oleh milisi yang didukung TNI mengejutkan masyarakat internasional, seiring dengan makin banyaknya rakyat Timor-Leste yang mengungsi karena takut akan kekerasan.

516. Negosiasi antara Portugal dan Indonesia mencapai puncaknya dengan apa yang dikenal sebagai Kesepakatan 5 Mei, yang menetapkan modalitas untuk suatu Jajak Pendapat yang memungkinkan rakyat Timor-Leste untuk menerima atau menolak paket otonomi khusus; penolakan akan mengarah pada kemerdekaan. Indonesia menolak untuk menyerahkan tanggung jawab keamanan selama pemungutan suara dan tanggung jawab ini diberikan pada polisi Indonesia. Masyarakat internasional merasa bahwa mereka tidak mampu mendesak Indonesia lebih jauh lagi tentang masalah ini, meskipun terdapat makin banyak bukti tentang keterlibatan militer dan polisi Indonesia dalam kekerasan terhadap para pendukung prokemerdekaan.

517. Pemungutan suara ditetapkan dilakukan pada Agustus 1999, untuk memungkinkan parlemen Indonesia mengesahkan hasilnya pada September.

Jatuhnya Soeharto

518. Pada Mei 1997, alat politik pemerintahan Orde Baru, Golkar, terpilih kembali dalam pemilihan parlemen nasional, dengan memenangi 74% jumlah suara.⁶⁷⁸ Tidak lama setelah itu krisis keuangan Asia muncul di Thailand pada Juli 1997 dan segera menjangkiti Indonesia. Bersamaan dengan jatuhnya Rupiah ke tingkat 18.000 terhadap dollar AS pada Januari 1998 dan bantuan IMF, Soeharto dipilih kembali sebagai Presiden oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) pada Maret 1998. Ketika Soeharto membentuk kabinet yang dianggap banyak orang didominasi oleh para kroni rezim tersebut, protes rakyat semakin berkobar. Tuntutan penggantian rezim oleh berbagai gerakan prodemokrasi mendapat dukungan dari kalangan elite Indonesia. Pada Mei, Ketua MPR Harmoko menanggapi secara positif tuntutan kaum reformis, sementara Panglima ABRI Jenderal Wiranto memberikan

dukungan militer untuk reformasi. Dua orang pemimpin oposisi yang muncul, Megawati Sukarnoputri dan Amien Rais, memberi indikasi kesiapan mereka untuk mengambilalih kekuasaan.

519. Tekanan rakyat meledak selama Mei, yang menyebabkan jatuhnya Soeharto. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia kemudian menemukan bahwa kekerasan dalam periode ini telah didalangi, dengan mengidentifikasi 20 orang anggota militer dan sipil di belakang berbagai kerusuhan tersebut.⁶⁷⁹ Pada 18 Mei, dengan dikuasainya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) oleh para mahasiswa, Soeharto kehilangan sebagian besar dukungannya. DPR meminta pengunduran dirinya. Pada malam hari 20 Mei, Jenderal Wiranto juga mengimbau pengunduran diri Soeharto, dan pada 21 Mei, Soeharto turun dari kursi kepresidenan.

520. Peristiwa ini memberikan seorang kepala negara baru bagi Indonesia, Presiden B.J. Habibie, yang segera menerapkan sejumlah reformasi yang luarbiasa. Slogan utama pada periode tersebut adalah "Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme", yang sering disebut KKN, dan yang mampu merangkum apa yang dianggap penyakit yang paling mewabah dari rezim Soeharto. Masyarakat sipil juga mengemukakan berbagai masalah lain seperti kebutuhan untuk menentang militerisme dan diakhirinya impunitas pihak militer. Agenda reformasi memengaruhi Indonesia dalam banyak cara. Komposisi elite politik Indonesia berubah, dan meskipun banyak politikus yang terkait rezim Soeharto selamat dari kejatuhan Soeharto, sejumlah politikus baru meningkat pamornya. Hal ini mendatangkan pluralisme ke perdebatan politik yang sudah lama ditekan selama kekuasaan Soeharto. Selain itu, kebebasan media dan debat publik yang kuat memastikan sejumlah besar masalah dapat dibahas secara terbuka dan banyak dari permasalahan tersebut mendapat perhatian politik yang berujung pada perubahan.

521. Presiden B.J. Habibie dianggap oleh banyak pihak hanya sebagai presiden sementara. Sebagai wakil presiden di masa Soeharto, dia dianggap sangat dekat dengan rezim Orde Baru, meskipun dia tidak memiliki pengikut yang besar atau basis kekuatan di dalam rezim tersebut. Sebagai presiden, dia harus hati-hati melangkah di antara militer yang kuat dan beberapa kelompok agama utama seperti sejumlah organisasi Islam sambil merundingkan langkah reformasi. Di kabinetnya, dia mempertahankan Wiranto sebagai panglima militer maupun menteri pertahanan.

522. Banyak pihak di kalangan masyarakat internasional menganggap ide status politik Timor-Leste sebagai masalah yang tertutup selagi Presiden Soeharto masih berkuasa. Dengan kepergiannya, dan dalam iklim Reformasi di Indonesia, tiba-tiba tercipta ruang untuk diskusi.

523. Gagasan tentang status otonomi khusus bagi Timor-Leste bukanlah hal yang baru, tapi pada zaman Soeharto tidak pernah dipertimbangkan secara serius. Barangkali tidak ada yang lebih tahu tentang hal ini daripada Menteri Luar Negeri yang sudah lama menjabat, Ali Alatas, tentang berbagai masalah bagi negaranya di arena internasional yang ditimbulkan oleh posisi Indonesia dan berbagai tindakannya di Timor-Leste. Dia sebelumnya telah mengusulkan

perubahan status Timor-Leste dalam Indonesia, dengan menawarkan otonomi khusus bagi Timor-Leste sebagai satu kemungkinan solusi. Soeharto menolak ide-idenya.⁶⁸⁰ Pada 6 Juni 1998, Komite Politik dan Keamanan dalam kabinet ini mendukung sebuah usulan untuk “otonomi luas” bagi Timor-Leste, dengan syarat masyarakat internasional mengakui kedaulatan Indonesia. Menteri Luar Negeri Alatas membawa usulan ini kepada Presiden B.J. Habibie pada 8 Juni dan kepada Kabinet pada 9 Juni. Presiden Habibie secara tak terduga mengumumkannya kepada media internasional pada 9 Juni.

524. Dalam waktu sembilan bulan, ide ini untuk menawarkan paket otonomi khusus pada Timor-Leste akan berubah menjadi penerimaan resmi Indonesia untuk melakukan tindakan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Timor-Leste.

CNRT dan kampanye diplomatik

525. Pintu menjadi terbuka bagi José Ramos-Horta di seluruh dunia setelah dia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian, dan dia bekerja keras memanfaatkan hal ini untuk menggalang dukungan bagi kampanye diplomatik bagi kemerdekaan. Hal tersebut juga memberikan dimensi internasional pada pembelaan lantang Uskup Belo terhadap hak asasi rakyat Timor-Leste, dan sangat meningkatkan perhatian internasional kepada Timor-Leste.

526. Setelah pertemuan pada 1997 dengan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, status Xanana Gusmão di mata dunia menguat dan ini diikuti prosesi para tamu penting ke sel penjara Cipinangya selama 1998 dan 1999.

527. Pada April 1998, pihak Resistansi meraih tonggak sejarah dalam perkembangannya, ketika para pemimpin partai politik besar Timor-Leste dan juga berbagai organisasi nonpolitik, termasuk Gereja Katolik, bertemu di Peniche di Portugal dan membentuk CNRT. Xanana Gusmão terpilih sebagai Presiden, dengan Ramos-Horta sebagai Wakil Presiden dan utusan pribadinya. Pembentukan CNRT melengkapi perkembangan bertahap Resistansi dari sebuah partai tunggal dengan dasar Fretilin menjadi organisasi dengan basis luas termasuk para mahasiswa, organisasi nonpemerintah, dan kalangan Gereja Katolik.

528. Pembentukan CNRT memosisikan Resistansi dengan baik untuk menghadapi kejadian-kejadian yang berkembang cepat di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia khususnya. [Lihat Bab 7.1.: Hak penentuan nasib sendiri.]

Dampak Reformasi di Timor-Leste

529. Pengumuman Presiden Habibie tentang usulan status baru bagi Timor-Leste, ditambah optimisme tuntutan untuk reformasi, menciptakan dukungan kuat publik untuk kemerdekaan di wilayah tersebut.

530. Pada 9 Juni di Dili, pertemuan publik untuk membahas masa depan wilayah tersebut dihadiri oleh banyak perwakilan aspirasi Timor-Leste, termasuk para

komandan gerilya dan prointegrasi yang setia, para pemimpin CNRT, dan anggota masyarakat sipil dan gerakan klandestin. Juga hadir pada kesempatan itu gubernur prointegrasi, Abilio Soares, yang pidatonya tentang usulan status khusus bagi Timor-Leste tidak diterima dengan baik. Banyak menganggap ini sebagai tindakan setengah hati, dan pertemuan tersebut sepakat untuk menuntut diadakannya referendum supaya rakyat dapat menentukan masa depan mereka.

531. Pada 23 Juni, demonstrasi besar di Dili secara terbuka menyerukan kemerdekaan. Khawatir akan kemungkinan konsekuensi yang terjadi karena sikap sangat gambang tersebut, Uskup Belo dan jajaran kepemimpinan CNRT segera mengimbau sikap yang lebih lunak, dan mengulang kembali keinginan mereka untuk sebuah periode transisi sebelum membahas kemerdekaan.

532. Sejak Juni, berbagai kelompok mahasiswa^{*} secara berani memimpin debat publik yang mulai menggeliat, dan memimpin serangkaian demonstrasi besar baik di Timor-Leste maupun di Indonesia. Pada Juli, Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor-Leste (ETSSC) yang baru saja dibentuk mengerahkan para mahasiswa untuk melakukan perjalanan ke seluruh Timor-Leste untuk melakukan sejumlah dialog tingkat desa, menjelaskan perkembangan terakhir, dan mendengarkan masukan dari masyarakat. Tanpa memedulikan penentangan militer di beberapa daerah, mereka mendengar beragam tuntutan kuat untuk penarikan mundur TNI dan untuk sebuah referendum.⁶⁸¹

533. Pada September, dua uskup Timor-Leste mengadakan pertemuan di Dare untuk mendorong rekonsiliasi antara para tokoh Timor yang mendukung integrasi dengan Indonesia dan yang mengupayakan kemerdekaan. CNRT secara terbuka menyatakan diri sebagai lembaga publik yang sah pada September, dan menempati sebuah kantor di Dili Selatan. Demonstrasi mahasiswa yang memprotes kehadiran militer dan menuntut referendum terjadi secara rutin selama periode ini. Keterbukaan ini tidak pernah terjadi sebelumnya selama masa pendudukan Indonesia. TNI di Timor-Leste tetap waspada, tetapi menahan diri dan tidak bertindak langsung melawan demonstrasi ini.

Munculnya para milisi

534. Menjelang akhir 1998, ketegangan mulai meningkat dan keterbukaan dari beberapa bulan sebelumnya mulai mendapat tekanan. Pada awal Oktober, sebuah kelompok pro-otonomi Timor menekan gubernur untuk memaksa pengunduran diri para pegawai negeri yang bergabung dalam Forsarepetil (Forum Sarjana Pro-Referendum dan Pembangunan Timor-Leste), sebuah kelompok proreferendum kalangan akademisi dan pegawai negeri. Hal ini memicu demonstrasi besar selama dua hari di Dili menentang tindakan gubernur. Basilio Araújo, seorang juru bicara prointegrasi, kemudian menggambarkan pada Komisi latar belakang keputusan ini:

.....
* Renetil dan Impettu di Indonesia; ETSSC di Timor-Leste.

Kami sekitar 20 orang, kami yang berasal dari grup itu, dan kami menyebut diri kami prointegrasi ... Kami bertemu dengan Pak Abilio [Soares, Gubernur] dan mendesaknya untuk membuat sebuah dekrit mengenai orang-orang yang telah memihak pada kemerdekaan: "Cukup, tanggalkan pakaian sebagai seorang pejuang kemerdekaan, dan jangan bekerja pada pemerintah, jangan bermuka dua." Tn. Abilio membuat dekrit tersebut, tapi ditekan oleh pemerintah pusat dan kemudian menariknya kembali.⁶⁸²

535. Pada 8 Agustus, penarikan mundur pasukan yang sangat dipublikasikan menyumbang pada persepsi bahwa situasi di Timor-Leste telah membaik. Indonesia mengklaim bahwa mereka hanya memiliki kurang dari 6.000 serdadu di wilayah tersebut, dan konon telah menarik mundur pasukan khususnya (Kopassus), yang kerap dituduh bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran berat hak asasi manusia.⁶⁸³ Tapi, dokumen militer yang dibocorkan pada bulan itu membuktikan sebaliknya. Jumlah pasukan masih 21.540 orang, termasuk Kopassus, dan bukannya melakukan pengurangan pasukan besar-besaran seperti yang dilaporkan ke media, kekuatan militer TNI justru perlahan meningkat.⁶⁸⁴ Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa TNI mengembangkan jaringan kelompok paramiliter di sebagian besar distrik. Dua belas tim ditempatkan di sebelas distrik, yang sebagian besar di antaranya terkait dengan unit Kopassus. Kelompok-kelompok ini membentuk basis milisi yang dengan cepat direkrut dalam bulan-bulan berikutnya.⁶⁸⁵ Pihak militer kemudian menyangkal bahwa para milisi tersebut adalah bagian integral struktur formalnya.

536. Tanda pertama perilaku yang akan datang dari para anggota paramiliter ini, yang belakangan akan dikenal sebagai milisi, terjadi pada November ketika ABRI dan anggota milisi Ablai, yang banyak di antaranya adalah pegawai negeri pemerintah daerah setempat, membalas serangan Falintil atas Koramil di Alas, Distrik Manufahi. Pada 9 November, Falintil membunuh tiga serdadu, menculik 13 prajurit, dan mencuri 36 senapan. Masyarakat mencari perlindungan ke Gereja Alas sesudah serangan tersebut. Pada 13 November ABRI membalas serangan Falintil dan wilayah tersebut diliputi kekerasan.⁶⁸⁶ Pihak militer Indonesia dan milisi memasuki gereja tersebut, dan memukuli mereka yang berada di dalam. Militer menahan penduduk sipil di seluruh wilayah itu untuk mencari Falintil. Komisi menerima kesaksian tentang penyiksaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ABRI terhadap mereka yang ditahan.⁶⁸⁷ Paling tidak, delapan orang terbunuh oleh ABRI atau milisi. Suatu penyelidikan ICRC menemukan sembilan orang yang tewas dalam serangan balasan tersebut, termasuk dua orang prajurit yang dibunuh oleh Falintil.⁶⁸⁸ Pembunuhan tersebut, yang terjadi setelah berbulan-bulan keterbukaan yang agak canggung, menimbulkan sejumlah protes keras di Dili. Setelah para mahasiswa menduduki gedung parlemen, tim pencari fakta segera dibentuk dari berbagai kelompok masyarakat sipil, tetapi tidak diperbolehkan masuk ke wilayah tersebut oleh pihak militer.⁶⁸⁹ Wartawan internasional melakukan perjalanan ke Alas dan mengamati anggota nonmiliter bersenjata menguasai daerah tersebut, yang mengindikasikan permulaan peran milisi sebagai garis terdepan kampanye militer melawan kemerdekaan.⁶⁹⁰

537. Kelompok milisi telah lama hadir di Timor-Leste. Tetapi, milisi yang muncul pada akhir 1998 dan awal 1999 sebagian besar terkait langsung dengan TNI bukan karena kesetiaan mereka pada *liurai* seperti kebiasaan sebelumnya.⁶⁹¹ Sebagian dari para milisi baru ini memiliki akar dalam pasukan bantuan militer^f yang dibina TNI sejak akhir 1970-an. Sebagian besar pemimpin milisi memiliki hubungan luas dengan Kopassus melalui beragam kelompok paramiliter lama di Timor-Leste.⁶⁹² Contohnya adalah Joanico Césario Belo, yang menjadi komandan milisi di wilayah Timur, Sektor A,^g yang sudah menjadi tenaga bantuan operasi (TBO) sejak masa kecilnya.⁶⁹³ Komandan Sektor B yang terkenal kejam, Eurico Guterres, memiliki latar belakang dalam paramiliter Gadapaksi pada dasawarsa 1990-an. Yang lainnya, Joni Marques dari Tim Alfa di Lautém, memiliki hubungan lama dengan Kopassus. TNI merekrut secara luas pada 1998 dan 1999 untuk membangun kepemimpinan inti ini.⁶⁹⁴ Anggota milisi lainnya termasuk anggota TNI dari Timor Barat dan Timor-Leste.⁶⁹⁵ Sebagian bergabung karena terpaksa. Yang lainnya ikut karena motivasi uang dan prestise (lihat Bagian 9: Rekonsiliasi komunitas).

538. Peran militer dalam membentuk milisi-milisi ini segera menjadi jelas. Indikator penting adalah bahwa pejabat penting militer di Timor-Leste menghadiri acara pelantikan kelompok milisi.⁶⁹⁶ Para pemimpin milisi sendiri menyatakan bahwa TNI telah mempersenjatai mereka.⁶⁹⁷ Dan yang lebih meyakinkan lagi, para pejabat senior TNI^h sendiri menyatakan bahwa mereka mempersenjatai berbagai kelompok tersebut.⁶⁹⁸ Jenderal Wiranto, Panglima ABRI mengakui keterlibatan TNI dalam milisi.⁶⁹⁹ Hubungan ini mulai terlihat jelas sejak akhir 1998 ketika berbagai kelompok milisi mulai muncul. Dokumen militer belakangan memberikan bukti meyakinkan tentang pasokan senjata oleh TNI kepada milisi,⁷⁰⁰ dan Tomas Gonçalves yang belakangan membelot dari milisi membenarkan keterlibatan unit intelijen Kopassus dan pejabat militer penting seperti Tono Suratman, Sudrajat, dan Damiri dalam perekrutan.⁷⁰¹

539. Cepatnya para milisi tersebut muncul dan konsistennya perilaku mereka menunjukkan adanya kekuatan organisasi besar di belakang mereka.⁷⁰² Ini adalah TNI, yang dalam iklim keterbukaan Reformasi membutuhkan pasukan yang dapat menyerang gerakan prokemerdekaan Timor-Leste yang terorganisasi dengan rapi. Salah satu alasan milisi lebih banyak dipersenjatai dengan senjata buatan sendiri adalah untuk menciptakan kesan bahwa milisi adalah gerakan spontan berbasis rakyat. Ini adalah muslihat besar, karena TNI memberikan senjata otomatis setidaknya bagi sebagian kelompok milisi serta berbagai dukungan logistik dan keamanan.⁷⁰³

.....
* Milisi di beberapa wilayah dibentuk dengan pengaruh keluarga *liurai*, contohnya keluarga Carvalho di Cassa.

^f Ini termasuk Hansip, Ratih, Wanra, Kamra (Polisi), serta TBO – Tenaga Bantuan Operasi.

^g Pembagian sektor (A, B, dan C) mengikuti komando sektor tempur di bawah Kopassus yang membagi Timor-Leste menjadi tiga wilayah.

^h Komandan Kodim Supardi pada 28 Januari, dan Komandan Kodam IX Adam Damiri pada 7 Februari. Mereka berdua diketahui mempersenjatai para milisi.

Xanana Gusmão mengimbau toleransi

540. Pada akhir 1998, meskipun meningkatnya ketegangan akibat kekerasan di Alas, penduduk Dili terus menyatakan secara terbuka hasrat mereka akan perubahan. Pada 12 November, warga melakukan demonstrasi publik pertama untuk mengenang pembantaian Santa Cruz. Malam itu, rakyat diam di rumah, dan menghiasi semua jalan kota Dili dengan ribuan lilin untuk mengenang orang yang meninggal. Pesan Tahun Baru Xanana Gusmão terfokus pada ide CNRT tentang otonomi transisional, dan mengusulkan menahan diri bagi suara-suara yang menginginkan referendum langsung. Dan yang paling penting, dia mengimbau toleransi menghadapi berbagai tekanan yang meningkat:

Mari kita berkonsentrasi untuk ... meraih: diakhirinya kekerasan militer; sebuah iklim toleransi politik yang lebih besar. Pendirian ini bertujuan untuk mencegah lebih banyak korban Timor-Leste yang jatuh. Para penjajah mempersenjatai rakyat Timor-Leste dan menyuruh mereka untuk membunuh saudara-saudari mereka sendiri. Daripada membiarkan diri kita terhanyut dalam rasa marah, mari kita berusaha berpikir dalam sikap politik yang seimbang. Jika tidak, kita akan terjebak dalam permainan para penjajah; kita akan memperkuat argumen Indonesia bahwa Timor-Leste terancam sebuah perang saudara baru.⁷⁰⁴

Negosiasi tentang paket otonomi

541. Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas berkunjung ke New York untuk menyampaikan gagasan otonomi kepada Sekjen PBB Kofi Annan pada 18 Juni. Pada Agustus, Indonesia menyetujui pembicaraan tiga pihak bersama PBB dan Portugal tentang otonomi khusus. Utusan Pribadi Sekjen PBB untuk Timor-Leste, Duta Besar Jamsheed Marker, mengelola proses negosiasi, yang bertujuan mencapai kesepakatan tentang isi dari paket otonomi khusus sebelum akhir tahun. Hambatan utama tampaknya adalah pertanyaan apakah otonomi yang diusulkan merupakan tahap menuju penentuan nasib sendiri atau sebuah tujuan akhir. Portugal memandang otonomi sebagai sebuah transisi menuju tindakan penentuan nasib sendiri, yang sesuai dengan rencana yang dibentuk sejak lama oleh CNRM/CNRT. Indonesia memiliki perspektif berbeda, dan memandang otonomi sebagai konsesi akhir, yang akan menutup persoalan tentang Timor-Leste di arena internasional. Pembicaraan awal mengkhhususkan pada isi dari paket otonomi tersebut bukan pada pertanyaan politik tersebut.

542. Dubes Jamsheed Marker juga berusaha melibatkan para pemimpin Timor-Leste ke dalam proses tersebut. Sejak penunjukannya pada 1997, Marker telah berusaha memperluas cakupan keterlibatan PBB lebih dari pembicaraan tiga arah dengan Portugal dan Indonesia. AIETD adalah hasil dari maksud ini, dan Marker telah mengembangkan hubungan kerja dengan para pemimpin utama Timor. PBB melakukan konsultasi antara lain dengan Xanana Gusmão, José Ramos-Horta,

Uskup Belo, dan Uskup Nascimento tentang perincian cetak-biru untuk otonomi yang dibuat untuk PBB.

543. Ketegangan di dalam Timor-Leste meningkat pada akhir 1998. Di satu sisi ada dorongan rakyat untuk membuka dialog politik dan sebuah referendum; di sisi lain ada strategi militer untuk mengembangkan milisi prointegrasi bersenjata untuk menghancurkan gerakan referendum. Hal tersebut menjadi semakin jelas bagi pemerintah utama internasional yang terlibat dalam masalah ini bahwa paket otonomi saja tidak akan menyelesaikan masalah.

544. Pada 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia John Howard menulis surat kepada Presiden B.J. Habibie, sebuah dokumen yang dianggap sangat memengaruhi pemikiran Presiden Habibie. Sementara Perdana Menteri Howard menegaskan kembali bahwa Australia lebih suka Timor-Leste menjadi bagian dari Indonesia, dia memberi contoh Kesepakatan Matignon mengenai Kaledonia Baru Prancis dan menganjurkan bahwa sebaiknya Indonesia mempertimbangkan untuk menerapkan otonomi khusus dengan “mekanisme kajian” yang akan secara efektif menjadi referendum beberapa tahun ke depan:

Untuk itu, layak dipertimbangkan, sebuah cara menanggapi keinginan rakyat Timor untuk sebuah tindakan penentuan nasib sendiri dengan cara yang menghindari sebuah keputusan awal dan akhir mengenai tentang masa depan provinsi tersebut.⁷⁰⁵

545. Saran untuk menghindari solusi yang cepat dan final bagi Timor-Leste ini sejalan dengan PBB, yang menganjurkan periode otonomi lima sampai tujuh tahun. Tapi, ini dipandang oleh Indonesia sebagai perubahan kebijakan yang besar oleh pendukung internasionalnya yang paling setia, sebuah perubahan yang mengakui hak rakyat Timor untuk penentuan nasib sendiri. Ketika cerita tentang surat Australia tersebut sampai ke publik, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer menjelaskan pada 12 Januari bahwa “kami lebih suka sebuah susunan di mana Timor-Leste memiliki tingkat otonomi yang tinggi tapi tetap menjadi bagian Indonesia secara hukum.”⁷⁰⁶

546. Presiden Habibie dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas sangat menginginkan resolusi mengenai negosiasi dengan Portugal sebelum pemilihan parlemen Indonesia yang akan dilakukan pada 7 Juni 1999, yang dapat menghasilkan pengangkatan Presiden baru.* Surat PM Howard yang asli dikirim ke Presiden Habibie pada 21 Januari. Presiden Habibie menulis sebuah catatan di pinggir yang berisi:

Jika, setelah 22 tahun, rakyat Timor-Leste tidak dapat merasakan persatuan dengan rakyat Indonesia ... akan layak dan bijaksana, jika dengan sebuah keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Provinsi ke 27 Timor-Leste dapat dengan terhormat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁰⁷

* Pada saat itu, Presiden Republik Indonesia tidak langsung dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat oleh Majelis Perwakilan Rakyat (MPR).

547. Terdapat banyak spekulasi tentang penyebab perubahan Habibie, dan mungkin terlalu dibesar-besarkan surat Perdana Menteri dan perubahan kebijakan Australia. Tapi, jelas bahwa Presiden Habibie menyadari sempitnya kesempatan untuk memberi dampak terhadap masalah yang tak berkesudahan ini, dan bahwa dia lebih terbuka pada pengaruh pandangan liberal internasional dibanding para pendahulunya dan banyak orang yang masih memegang posisi kuat di Indonesia.

548. Pada 27 Januari 1999, sebelum kerangka otonomi khusus dirampungkan, Indonesia mengumumkan perubahan kebijakannya: Indonesia akan memberi Timor-Leste kesempatan untuk menolak tawaran otonomi khusus tersebut. Jika rakyat Timor-Leste menolak paket otonomi tersebut, Indonesia akan mencabut undang-undangnya pada Juni 1976 yang memasukkan wilayah tersebut ke dalam Republik Indonesia. Empat orang jenderal TNI yang kuat masuk dalam keanggotaan Kabinet Presiden Habibie. Adalah sesuatu yang luarbiasa bahwa mereka menerima kebijakan ini, dan penjelasan yang mungkin adalah bahwa mereka yakin mayoritas pemilih Timor-Leste dapat diyakinkan untuk memilih melanjutkan integrasi dengan Indonesia.⁷⁰⁸

549. Sebuah pemungutan suara yang jelas akan memberi penyelesaian yang pasti pada permasalahan Timor-Leste, sebuah masalah yang telah mengganggu Indonesia sejak lama. Jenderal Wiranto mengusulkan tidak perlu ada periode transisi, pendapat yang juga dimiliki oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, yang mengatakan:

Kenapa Indonesia harus membayar, jika Timor-Leste tidak menghendakinya? Jika tawaran kami tidak bisa diterima, saya tidak akan memberi alternatif di mana mereka meminta 5 - 10 tahun dan kemudian referendum.⁷⁰⁹

550. Xanana Gusmão dipindahkan dari penjara Cipinang yang dijaga ketat ke tahanan rumah pada 10 Februari 1999. Sementara masih ditahan dan dibatasi ruang geraknya untuk memainkan peran penuh untuk mencari solusi bagi Timor-Leste, dia menerima banyak pengunjung Timor-Leste, Indonesia, dan tamu terkemuka internasional di rumah yang menjadi tempat tahanan di Salemba, Jakarta, dan semakin diakui sebagai seorang negarawan internasional. Sementara itu masih terdapat tahanan dan narapidana politik Timor-Leste lainnya yang mendekam di berbagai penjara di Indonesia.

Peningkatan teror milisi

551. Beberapa minggu sebelum pengumuman 27 Januari oleh Presiden Habibie di Jakarta, lebih daripada 4.000 orang mengungsi di Katedral Suai yang belum selesai dibangun.⁷¹⁰ Mereka berusaha menghindari kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok milisi yang berbasis di Cassa (Ainaro), yang kemudian dikenal sebagai milisi Mahidi (Mati Hidup dengan Indonesia). Kelompok yang dipimpin oleh Cancio Carvalho, anak dari keluarga *liurai* lokal, melaksanakan sejumlah besar pembunuhan kejam yang diarahkan pada para pemimpin CNRT lokal. Salah satu

yang paling kejam, pada 23 Januari 1999, di kota kecil Galitas, seorang perempuan hamil dibunuh, dan bayinya digorok keluar dari perutnya.⁷¹¹ Tiga hari kemudian, CNRT menulis kepada Sekjen PBB:

Memang benar bahwa banyak dari “pasukan-pasukan” ini adalah warga Timor-Leste. Yang tragis bagi kami adalah bahwa ini digambarkan sebagai perang saudara oleh pihak otoritas—rakyat Timor melawan rakyat Timor. Kami menyadari adanya perbedaan pendapat dalam masyarakat kami. Kami juga menyadari mengapa perbedaan ini ada. Kami tidak memiliki sumberdaya ataupun kekuatan untuk mengendalikan apa yang sedang terjadi.⁷¹²

552. Menyusul pembunuhan di Mauboke (Maubara, Liquicá) dan menjelang pembunuhan di Gereja Liquicá, pada 5 April Xanana Gusmão mengeluarkan pernyataan kemarahan yang merestui ‘perlawanan rakyat’ melawan kekerasan milisi yang terus berlanjut.⁷¹³ Hari berikutnya milisi membunuh sebanyak enam puluh orang pengungsi di Gereja Liquicá, dengan kehadiran dan keterlibatan militer dan Brimob. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, bagian tahun 1999) Pejabat senior TNI terlihat di gereja tersebut persis sebelum kejadian tersebut.⁷¹⁴ Milisi kemudian membunuh tujuh orang di Cailaco (Bobonaro) pada 12 April. Setelah demonstrasi massal di depan kantor Gubernur di Dili tempat pemimpin Aitarak Eurico Guterres memerintahkan milisi untuk “menangkap dan membunuh (para pendukung kemerdekaan) bila perlu”,⁷¹⁵ milisi mengamuk di Dili. Di rumah Manuel Carrascalão mereka membunuh 12 orang.⁷¹⁶ Menteri Luar Negeri Irlandia David Andrews sedang melakukan pertemuan di Dili dengan Komandan Militer Timor Timur Kolonel Tono Suratman pada waktu itu, dan melihat dia menerima laporan tentang pembantaian itu dan tidak melakukan apa-apa. Milisi juga menyerang dan membakar sejumlah kantor satu-satunya surat kabar di wilayah tersebut, *Suara Timor Timur* (STT). Meskipun secara tradisional STT menjadi juru bicara kebijakan Indonesia, pada akhir 1998 dan awal 1999, STT memberikan liputan yang relatif netral tentang kekerasan yang meningkat dan dukungan terhadap referendum, yang membuat marah para pendukung setia integrasi. Di tengah-tengah meningkatnya kekerasan pada April, para pastor dan suster Gereja Katolik mengadakan parade perdamaian dengan membawa lilin menyala sepanjang jalan-jalan di Dili dalam upaya menenangkan situasi.

553. Dalam tiap kasus ini pembunuhan-pembunuhan tersebut mempunyai unsur yang sama yaitu dukungan langsung dan keterlibatan militer, pelakunya adalah milisi, sasarannya adalah para pendukung kemerdekaan, dan pembuangan mayat secara sistematis oleh militer yang menyulitkan penghitungan jumlah kematian yang pasti. Pola-pola ini sangat menunjukkan keterlibatan TNI dalam melaksanakan operasi.⁷¹⁷ Kekerasan ini dirancang untuk menciptakan ilusi sebuah konflik antara rakyat Timor-Leste bersenjata. Pembantaian Liquicá dan Dili kemudian dijelaskan oleh Kolonel Tono Suratman terjadi karena diprovokasi oleh serangkaian tembakan dari kalangan pendukung kemerdekaan.⁷¹⁸ Tapi, penyelidikan menunjukkan bahwa tidak ada kejadian di mana para korban memiliki senjata.⁷¹⁹

554. Pada 20 April, Jenderal Wiranto terbang ke Dili untuk mengawasi para pemimpin kemerdekaan dan otonomi Timor-Leste menandatangani perjanjian perdamaian untuk menghentikan kekerasan. Ini menutupi fakta bahwa kekerasan tersebut adalah pembunuhan orang-orang sipil tidak bersenjata yang sedang mencari perlindungan, dan samasekali bukan konflik antara dua kelompok bersenjata. Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS) dibentuk, di mana di dalamnya juga terdapat pihak militer, polisi, dan pemerintahan sipil.⁷²⁰ Wakil CNRT dan Falintil juga dilibatkan.

Kesepakatan 5 Mei

555. PBB menyerahkan proposal berisi rencana otonomi pada Februari 1999, yang disebut SARET (Special Autonomous Region of East Timor). Indonesia akan tetap mengendalikan masalah luar negeri, matauang, pertahanan, dan keuangan, sementara East Timorese Regional Council akan memiliki wewenang luas dalam membuat undang-undang dan mengendalikan polisi dan pengadilan. TNI hanya akan digunakan untuk pertahanan eksternal, selain itu akan ditempatkan di barak-barak.

556. Pada Maret, Indonesia memutuskan pemungutan suara langsung. Indonesia menginginkan keputusan tersebut tidak dapat disangkal dan final. Pemungutan suara akan disebut 'Jajak Pendapat', menghindari penggunaan kata referendum yang menyatakan secara tidak langsung penentuan nasib sendiri dan pilihan berdaulat bagi rakyat Timor-Leste, yang menurut Indonesia telah terjadi melalui petisi Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT) pada 1976, tentang integrasi dan Undang-Undang No. 7/1976, tentang integrasi Timor-Leste ke Indonesia sebagai provinsi ke-27.

557. Dengan makin memburuknya situasi keamanan, dialog yang disponsori PBB antara Portugal dan Indonesia pada 22 April membahas sejumlah masalah keamanan untuk melucuti senjata milisi, mengurangi jumlah anggota TNI, membatasi Falintil di barak-barak, dan penetapan polisi sipil. Tetapi Menteri Luar Negeri Ali Alatas menolak untuk menyetujui hal-hal spesifik.⁷²¹ Baik Amerika Serikat maupun Australia memberitahu Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal, Jamsheed Marker, untuk tidak membahayakan negosiasi dengan penekanan yang terlalu besar pada keamanan.⁷²²

558. Pada 5 Mei Indonesia dan Portugal menandatangani sejumlah persetujuan tentang implementasi pemungutan suara. Indonesia menginginkan hasil sebelum Rapat MPR pada September agar dapat disahkan dalam undang-undang Indonesia. Tanggal yang disetujui adalah 8 Agustus. Hal ini memberikan jadwal ketat dan kesempatan yang terbatas. Kata-kata yang disetujui tentang pemungutan suara meminta rakyat Timor apakah mereka menerima atau menolak otonomi khusus yang ditawarkan bagi Timor-Leste dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjanjian tersebut menekankan "sebuah pemungutan suara yang langsung, rahasia, dan umum" (pasal 1), dan bahwa "tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk menjaga perdamaian dan keamanan ... sehingga sebuah referendum dapat berjalan dalam suasana yang bebas intimidasi, kekerasan atau campur tangan dari

kedua belah pihak.” (pasal 3). Persetujuan ini mendefinisikan suatu periode interim sesudah pemungutan suara, dengan kehadiran PBB yang mencukupi di Timor-Leste. Pedoman SARET merupakan bagian dari perjanjian tersebut, di mana PBB bertanggung jawab untuk menjalankan kampanye informasi tentang pedoman-pedoman perjanjian tersebut. Baik Indonesia maupun Portugal dilarang untuk berkampanye untuk opsi apapun.

Pengaturan keamanan dalam Kesepakatan 5 Mei

559. Kesepakatan 5 Mei gagal mendefinisikan tanggung jawab keamanan secara memadai. Polisi Indonesia secara formal diberi tanggung jawab untuk keamanan. Polisi baru saja dipisahkan dari militer, dan masih berada di bawah komando Jenderal Wiranto, Menteri Pertahanan. Perjanjian tersebut mengalokasikan 300 orang polisi sipil internasional tak bersenjata untuk mendukung sejumlah tim elektoral PBB, dan kemudian ditambah dengan 50 orang perwira penghubung, yang dianggap lebih layak untuk berhubungan dengan TNI.

560. Kesepakatan tersebut menuntut “kenetralan absolut TNI,” tetapi gagal memaksa TNI mengurangi jumlahnya atau melucuti senjatanya. Mereka menyatakan, secara samar, bahwa KPS yang baru dibentuk bertanggung jawab untuk “peletakan senjata.”⁷²³ José Ramos-Horta, menyadari kekurangan pengaturan keamanannya, tidak menghadiri penandatanganan kesepakatan tersebut. Dia sebelumnya telah memperingatkan PBB, dalam sebuah surat pada Kofi Annan, bahwa Timor-Leste tidak bisa merasa aman “dengan ‘pengamanan’ yang disediakan oleh tentara dan kelompok kriminal yang sama yang telah mengubah negara ini menjadi neraka.”⁷²⁴ PBB bukannya tidak menyadari bahaya dari pengaturan keamanan ini, dan Sekretaris Jenderal menulis ke Indonesia menyampaikan sejumlah kekhawatiran. Dia menunjukkan kesiapannya untuk membatalkan pemungutan suara jika keamanan tak dapat memadai. Tapi, surat ini tidak resmi dan syarat-syaratnya tidak disetujui oleh Indonesia. Hal ini melemahkan PBB selama proses tersebut. Ian Martin, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal, kemudian menulis bahwa meski dengan susunan keamanan yang lebih ketat pun “PBB masih akan menghadapi dilema yang akan muncul: apakah melanjutkan atau tidak dalam kondisi-kondisi keamanan yang jelas-jelas melanggar perjanjian Indonesia.”⁷²⁵

561. Pada 5 Mei, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Johny Lumintang mengirim telegram ke komando Daerah Militer Bali (Kodam IX Udayana) meminta dilakukannya persiapan rencana evakuasi bagi Timor-Leste. Ini menghasilkan rencana pasca-pemungutan-suara pihak polisi dan militer untuk, antara lain, mengevakuasi hampir seperempat juta orang dari Timor-Leste.⁷²⁶ Rencana tersebut menunjukkan antipati TNI terhadap beragam aktor masyarakat sipil, termasuk para pemimpin kemerdekaan dan para mahasiswa, Gereja, pengamat internasional, dan

* Rencana-rencana operasional mencakup Operasi Cabut [yang gagal mencapai tujuannya]; Operasi Wira Dharma 99 yang dilaksanakan oleh Korem, dan Operasi Hanoi Lorosae II yang dilaksanakan oleh Polisi. [Koleksi dokumen Yayasan HAK].

PBB, yang jelas bertentangan dengan netralitas yang diwajibkan oleh Kesepakatan 5 Mei. Baik polisi maupun TNI tidak memberi tahu PBB tentang adanya rencana ini sampai beberapa saat menjelang pemungutan suara.⁷²⁶

Jajak Pendapat

Tinjauan

562. Staf PBB mulai mendarat di Timor-Leste pada akhir Mei 1999, untuk membentuk Misi Perserikatan Bangsa di Timor-Leste (UNAMET). Selama Juni, staf elektoral internasional UNAMET, polisi sipil, dan pejabat penghubung militer ditempatkan di ketigabelas kabupaten di wilayah tersebut. Hanya ada waktu kurang dari empat bulan untuk menghadapi Jajak Pendapat.

563. Tingkat tindak kekerasan yang meningkat pada April, menjadi agak mereda dengan kedatangan staf PBB dan semakin banyaknya kehadiran rombongan media massa luar negeri dan pengamat Jajak Pendapat. Meski demikian, mereka yang bertanggung jawab terhadap pembantaian pada April masih berkeliaran dan ketegangan masih tinggi. Kelompok militan di seluruh wilayah masih didukung oleh militer dan polisi Indonesia dan ada upaya untuk mengesahkan keberadaan mereka dalam sistem pemerintahan militer Indonesia.

564. Upaya nyata untuk mendamaikan perwakilan yang prokemerdekaan dan pro-otonomi oleh tokoh-tokoh Timor-Leste, gagal membuahkan hasil, sebagian penyebabnya karena upaya tersebut tidak menyinggung peran TNI dalam tindak kekerasan yang terjadi. Pasukan Falintil sendiri masuk ke barak-barak mereka. Sebaliknya, pasukan TNI dan milisi pro-otonomi tidak dikembalikan ke barak. Pelucutan senjata para milisi sebelum Jajak Pendapat lebih bersifat seremonial ketimbang sungguh-sungguh.

565. UNAMET menunda dimulainya pendaftaran pemilih atas alasan keamanan dalam Juni, dan Ian Martin terbang ke Jakarta untuk membicarakan masalah ini dengan Panglima Besar TNI, Jenderal Wiranto. Pendaftaran pemilih pun dilaksanakan, dan dalam waktu 22 hari sudah terdaftar sebanyak 451.792 pemilih.⁷²⁷

566. Hampir 40.000 orang mengungsi akibat tindak kekerasan yang terjadi sebelum kedatangan UNAMET, dan karena intimidasi milisi, pengungsian terus berlanjut hingga beberapa minggu menjelang pemilihan. Kebanyakan para pengungsi berasal dari barat Kabupaten Bobonaro, Covalima, dan Liquiçá. Sebagian pengungsi lari ke Timor Barat sebelum Jajak Pendapat. Dalam situasi yang tegang dan kadang-kadang diwarnai kekerasan tersebut kampanye umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kelompok pro-otonomi menggelar sejumlah rapat akbar. Sedangkan pendukung prokemerdekaan hanya sekali mengadakan rapat akbar, di ibukota pada hari terakhir masa kampanye.

567. Pada awalnya dijadwalkan pada 8 Agustus, Jajak Pendapat diundur ke 30 Agustus. Pada hari Jajak Pendapat itu, para pemilih telah memadati semua tempat

pemungutan suara di seluruh wilayah jauh sebelum jam dimulainya pemungutan suara. Hal yang luarbiasa, sebanyak 98,6 persen pemilih terdaftar mendatangi tempat pemungutan suara. Setelah memberikan suara, para pemilih bergegas kembali ke rumah, mencerminkan betapa tegangnya situasi saat itu.

568. Suara dibawa ke Dili untuk dihitung. Di sejumlah tempat, kekerasan terhadap staf PBB dan pendukung prokemerdekaan terjadi menjelang berakhirnya hari pemilihan. Selama hari-hari setelah Jajak Pendapat, serangan yang dilakukan oleh milisi pro-otonomi semakin meningkat. Di tengah ancaman tindak kekerasan, UNAMET mengumumkan hasil Jajak Pendapat pada pagi hari 4 September. Sebanyak 78,5 persen pemilih secara tegas menolak usulan otonomi khusus dalam wadah Republik Indonesia, dan hanya 21,5 persen yang memilih otonomi khusus.

Penempatan UNAMET

569. Petugas PBB mendarat di Timor-Leste beberapa saat setelah penandatanganan Kesepakatan 5 Mei untuk menilai situasi dan bantuan yang dibutuhkan misi pemilihan. Staf UNAMET mulai bekerja pada akhir Mei, dan pada 4 Juni bendera PBB dikibarkan di kantor PBB di Dili. Staf UNAMET berdatangan selama Juni, terdiri atas petugas pemilihan sipil, polisi sipil tak bersenjata, dan perwira-penghubung militer dari negara-negara di seluruh dunia.^{*} Petugas warga Timor yang berjumlah sekitar 4.000 pada hari pemungutan memainkan peran penting sebagai petugas penerjemah, administrasi, dan logistik, serta staf pendukung dalam kegiatan pendaftaran dan pemungutan suara. Mereka bekerja di bawah pimpinan Ian Martin yang merangkap jabatan sebagai Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Jajak Pendapat di Timor dan Ketua Misi PBB untuk Timor (UNAMET).[†] Jajak Pendapat pada awalnya ditetapkan pada 8 Agustus, sehingga jadwal pelaksanaannya menjadi sangat ketat.

Komisi Pemilihan

570. Kesepakatan 5 Mei menetapkan adanya Komisi Pemilihan yang independen. Sekretaris Jenderal PBB menunjuk tiga ahli internasional terkemuka untuk Komisi

^{*} Personel internasional UNAMET terdiri atas tim pemilihan yang bermarkas di Dili dan delapan petugas regional yang dijabat oleh 28 staf profesional dan sekitar 500 sukarelawan PBB, 275 orang polisi, 15 pejabat politik, 9 petugas informasi umum, 271 staf administrasi dan staf pendukung, dan 16 petugas keamanan, semuanya berasal dari lebih daripada 70 negara. Sebelumnya yang tidak termasuk dalam misi adalah sebanyak 50 perwira penghubung-militer yang diikutkan pada Juni, setelah pengakuan internasional terhadap peran utama TNI dan pentingnya upaya untuk memengaruhi mereka. [Lihat Martin, *Self Determination In East Timor*, hal. 38 - 39 dan hal. 41- 42.]

[†] Ian Martin telah bekerja untuk PBB dan organisasi internasional lainnya pada sejumlah jabatan senior dari 1985 sampai 1999. Ia adalah Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional 1986 - 1992, dan sebelumnya menjabat sebagai Ketua Departemen Peneliti Kawasan Asia Pasifik di organisasi tersebut. Ian Martin memberi kesaksian kepada Komisi mengenai periode UNAMET pada acara dengar pendapat nasional mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, tanggal 15 -17 Maret 2003.

tersebut.* Komisi tersebut benar-benar independen dari UNAMET dan PBB di New York, dan bertanggung jawab untuk memastikan setiap tahap Jajak Pendapat tersebut. Komisi juga merupakan wasit terakhir atas semua keluhan atau tentangan terhadap proses tersebut.

571. Anggota komisi tiba di Dili sesaat setelah dimulainya masa pendaftaran dan terus mengamati setiap fase proses Jajak Pendapat.

Pilihan

572. Pertanyaan yang diajukan kepada orang Timor dalam kertas suara dibagi menjadi dua bagian, di mana pemilih diminta untuk memilih satu opsi. Pilihan didasarkan penerimaan atau penolakan terhadap tawaran paket otonomi khusus, yang didasarkan pada Wilayah Otonomi Khusus yang diusulkan atau dikenal dengan nama SARET. Kertas suara berbunyi:

“Apakah Anda menerima tawaran otonomi khusus untuk Timor-Leste dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia?” atau “Apakah Anda menolak tawaran otonomi khusus untuk Timor-Leste, yang akan mengakibatkan Timor-Leste berpisah dari Indonesia?”

573. Indonesia dan Portugal dilarang keras oleh Kesepakatan 5 Mei untuk mendukung salah satu opsi tersebut. Mandat UNAMET meliputi kewajiban untuk memberikan penjelasan umum kepada rakyat Timor-Leste tentang perincian tawaran otonomi khusus tersebut. Hal ini dilakukan melalui televisi, radio, dan selebaran.⁷²⁸

Koordinasi pemerintah Indonesia untuk Jajak Pendapat

574. Indonesia membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (Satgas P3TT), yang bertanggung jawab terhadap Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta. Pihak militer dalam Satuan Tugas ini diwakili oleh Jenderal Zacky Anwar Makarim, pejabat TNI paling senior di Timor-Leste selama Jajak Pendapat. Satuan Tugas ini adalah penghubung pertama bagi UNAMET, yang stafnya mengadakan rapat hampir tiap hari dengan anggota Satuan Tugas.⁷²⁹

Kehadiran masyarakat internasional di Timor-Leste

575. Dengan kehadiran PBB di Timor-Leste, masyarakat internasional mengalir deras ke wilayah yang selama ini merupakan kawasan tertutup bagi mereka. Rombongan media massa internasional meliput persiapan Jajak Pendapat, dan wakil surat kabar dan jurnal internasional terkemuka juga berada di sana. UNAMET memberikan izin kepada sekitar 600 wartawan dalam Jajak Pendapat tersebut.⁷³⁰

* Hakim Johann Kriegler (Ketua Komisi Pemilihan Afrika Selatan) yang memimpin Komisi, Pat Bradley (Pejabat Pemilihan untuk Irlandia Utara), dan Bong-Suk Sohn (Ketua Komisi Pemilihan Nasional Republik Korea Selatan).

576. Sejumlah pemerintah negara-negara asing kunci melakukan pemantauan diplomatik ketat atas situasi di Timor-Leste selama periode UNAMET tersebut. Amerika Serikat membentuk cabang konsulat dari Kedutaan Besarnya di Jakarta dan delegasi Kongres Amerika mengunjungi Timor-Leste bulan Agustus. Australia khususnya menempatkan staf konsulatnya dalam jumlah yang besar di Dili.

577. Portugal dan Indonesia mengirim tim pemantau yang masing-masing berjumlah sekitar 50 anggota, yang berkeliling di seluruh kawasan selama pendaftaran, kampanye, dan persiapan terakhir menjelang pemilihan.⁷³¹ Mereka mengawasi pada hari Jajak Pendapat di sejumlah tempat pemungutan suara di seluruh wilayah termasuk penghitungan suara yang dilakukan di Dili. Selain pemantau resmi dari Portugis dan Indonesia tersebut, UNAMET menyiapkan sekitar 2.300 pemantau resmi, yang mengharuskan mereka untuk mematuhi peraturan tata tertib yang memastikan kenetralan mereka. Hampir 500 pemantau internasional datang bersama delegasi pemerintah mereka, seperti dari Australia, Brasil, Kanada, Cile, Irlandia, Selandia Baru, Spanyol, dan Uni Eropa. Selain itu, hadir dalam jumlah besar wakil organisasi masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah baik dari dunia internasional, Indonesia, maupun Timor. Dua LSM, yakni Carter Center dan IFET (Federasi Internasional untuk Timor), membentuk berbagai tim pemantau di tingkat kabupaten.⁷³²

578. Kehadiran masyarakat internasional ini belum pernah terjadi dalam sejarah Timor-Leste. Selama masa 25 tahun kehadiran Indonesia di sana, tidak dapat dibayangkan bahwa kawasan tersebut akan begitu terbuka bagi masyarakat internasional. Setelah berbulan-bulan terjadi tindak kekerasan berdarah terhadap masyarakat sipil hingga menjelang Kesepakatan 5 Mei, ketika nyaris tidak ada masyarakat internasional di Timor-Leste, keberadaan masyarakat internasional di seluruh kawasan tersebut memastikan tingkat pemantauan yang mungkin berperan besar terhadap berkurangnya serangan yang dilakukan oleh milisi atau TNI.

Pemantau dari Timor-Leste dan Indonesia

579. UNAMET memberikan izin bagi sekitar 1.700 pemantau dari LSM Timor-Leste dan Indonesia untuk mengawasi Jajak Pendapat. Banyak di antara mereka berasal dari organisasi mahasiswa dan aktivis, tapi mereka semua harus mematuhi tata tertib UNAMET untuk pemantau resmi untuk menjamin kenetralan mereka.⁷³³ UNAMET mengizinkan CNRT dan UNIF (Front Bersama untuk Otonomi Timor-Timur) untuk menunjuk pemantau, yang dikenal sebagai wakil partai, untuk mengawasi Jajak Pendapat dan penghitungan suara.

Pengamanan untuk Jajak Pendapat

580. Situasi keamanan yang rawan di seluruh wilayah tetap menjadi ancaman yang paling besar bagi proses Jajak Pendapat. Meski operasi militer besar oleh militer Indonesia dan milisi tidak mungkin terjadi tanpa diketahui masyarakat internasional, militer Indonesia tidak melucuti senjata milisi ataupun melarang kehadiran mereka

yang menakutkan di tengah masyarakat. Setelah pembantaian massal pada April di Gereja Liquiçá dan di rumah Manuel Carrascalão di Dili, tidak ada upaya untuk menyelidiki dan menahan mereka yang bertanggung jawab. Tiadanya sanksi hukum atas tindak kejahatan yang terjadi di akhir 1998 dan awal 1999 masih tetap berlangsung, meskipun PBB dan masyarakat internasional hadir di sana.

581. Kesepakatan 5 Mei memberikan tanggung jawab formal kepada polisi Indonesia untuk memastikan keamanan selama Jajak Pendapat. Pengaturan ini ternyata sangat tidak memadai. Masalah kelembagaan utamanya adalah status subordinasi Polri terhadap TNI. Meski terdapat pemisahan kelembagaan antara komando TNI dan Polri sejak April 1999, keduanya masih di bawah kendali Menteri Pertahanan, Jenderal Wiranto. Ada budaya yang berakar kuat perihal dominasi TNI terhadap Polri dalam berbagai masalah operasional. Keberadaan TNI dalam jumlah besar di seluruh wilayah Timor-Leste hingga ke tingkat masyarakat, memberikan tekanan yang luarbiasa kepada polisi dalam kapasitasnya untuk bertindak secara mandiri sebagai penjaga hukum dan ketertiban.

582. Polisi secara konsisten terbukti tidak mampu atau tidak berminat mengendalikan kekerasan yang terjadi selama Jajak Pendapat. Alasan lain atas hal ini adalah kehadiran sejumlah besar polisi anti huru-hara, yakni Brimob, yang terkenal dengan kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan di Timor-Leste selama dasawarsa 1990-an. Jumlah polisi, khususnya jumlah Brimob, selama periode Jajak Pendapat bertambah hingga menjadi 8.000 personel.⁷³⁴ Polisi secara umum gagal merespons secara cepat kekerasan yang dilaporkan atau menahan para pelaku kejahatan. Hal ini memberi keleluasaan kepada mereka yang melakukan tindak kekerasan dan intimidasi di seluruh wilayah. Contoh nyata hal ini adalah ketika polisi gagal bertindak terhadap serangan yang dilakukan oleh milisi Besi Merah Putih (BMP) terhadap konvoi kemanusiaan pada 4 Juli, meski secara khusus polisi telah ditugaskan untuk memberikan perlindungan.⁷³⁵ Lebih celaka lagi, polisi secara langsung dan berulang-ulang terlibat mendukung kekerasan yang dilakukan oleh milisi. Contoh paling nyata adalah pembunuhan Bernardino Augusto Guterres pada 26 Agustus 1999 yang ditembak mati oleh Brimob di Becora, Dili, sementara para milisi mengaum tidak jauh dari sana.⁷³⁶

583. Perwira-Penghubung Militer UNAMET (MLO) tidak dapat memperoleh informasi yang akurat dari TNI mengenai jumlah tentara dan penempatan mereka, meskipun diyakini bahwa jumlah TNI di Timor-Leste lebih daripada 15.000 personel.⁷³⁷ Meski Xanana Gusmão terus berupaya bernegosiasi agar TNI mengurangi jumlah tentara dan menarik sisa pasukan ke barak kabupaten, militer Indonesia masih terus ditempatkan hingga di tingkat desa di seluruh kawasan Timor-Leste.⁷³⁸

584. Kesepakatan 5 Mei tidak memuat ketentuan langsung mengenai masuknya TNI, milisi, atau Falintil ke barak, ataupun pelucutan senjata mereka. Tapi hal ini diserahkan kepada Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS) yang dibentuk oleh Jenderal Wiranto pada 21 April setelah terjadinya pembunuhan massal di Liquica

dan Dili pada bulan itu.’ KPS bertanggung jawab “dengan bekerja sama dengan PBB, (untuk) menyusun peraturan tata-tertib yang harus ditaati oleh semua pihak, selama periode sebelum dan sesudah Jajak Pendapat, untuk peletakan senjata dan mengambil langkah-langkah untuk melakukan pelucutan senjata”. KPS terbukti tidak efektif dalam melaksanakan tanggungjawabnya, meski anggota Komisi telah menandatangani kesepakatan pada 18 Juni bahwa kedua belah pihak akan menghentikan semua tindak kekerasan dan menyerahkan semua senjata kepada pihak yang berwenang.⁷³⁹

Kekerasan oleh TNI-Milisi: Juni - Juli

585. Banyak sekali terdapat bukti yang menggambarkan pengarahannya TNI untuk kampanye pro-otonomi dan kekerasan milisi.⁷⁴⁰

586. Setelah Kesepakatan 5 Mei, TNI menggambarkan milisi sebagai kelompok pertahanan sipil. Bupati Dili mendirikan Pam Swakarsa (Pengamanan Swakarsa) pada 17 Mei 1999. Keputusan ini menyebutkan Gubernur, Komandan Korem (Danrem), dan Kepala Kepolisian Wilayah sebagai penasihat utama Pam Swakarsa, dan Eurico Guterres sebagai ‘Komandan Operasional’. Di antara 2.650 anggota Pam Swakarsa yang terdaftar di Dili, 1.521 orang di antaranya adalah anggota Aitarak.⁷⁴¹ Ini memberikan tingkat keabsahan tertentu bagi milisi, yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki.⁷⁴² Gambaran yang secara luas dibentuk oleh mereka adalah Timor-Leste akan menjadi “lautan api” jika orang Timor-Leste memilih merdeka. Sebagai petunjuk atas hal ini, jauh-jauh hari sebelum referendum, pimpinan TNI di Timor-Leste, Kolonel Tono Suratman, dalam wawancara dengan TV Australia dalam program tayang *Sunday* mengenai peristiwa terkini, pada Juni mengatakan:

Saya ingin menyampaikan pesan ini kepada Anda. Apabila pihak prokemerdekaan menang, tidak hanya pemerintah Indonesia yang harus menghadapi hal-hal yang mengikutinya. PBB dan Australia juga harus menyelesaikan persoalan ini dan yah, jika ini terjadi, maka tidak akan ada pemenang. Semuanya akan dihancurkan. Timor-Leste akan musnah. Akan lebih buruk daripada 23 tahun yang lalu.⁷⁴³

587. Komisi mendengarkan kesaksian dari Ian Martin atas bukti yang dikumpulkan oleh staf UNAMET mengenai keterkaitan antara TNI dengan pemerintah daerah dan kelompok milisi. Ia menulis:

Dari staf kami yang masuk ke sejumlah kabupaten dan kecamatan, kami menjadi lebih paham tentang kegiatan milisi. Kami jadi makin

.....
* KPS terdiri atas dua anggota CNRT/Falintil dan dua prointegrasi, yang digambarkan sebagai pihak yang berkonflik, bersama dengan anggota militer Indonesia, polisi, dan pemerintah setempat. Tidak ada wakil masyarakat sipil dan PBB tidak disertakan. Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia, Komnas HAM, juga termasuk KPS. [Lihat Martin, *Self Determination*, hal. 30 dan 70.]

*mengerti bahwa para milisi telah dibentuk, dipersenjatai, dan diperintah oleh TNI, dan memiliki hubungan dengan pemerintah setempat. Kami secara langsung mendapati milisi dilatih dan diperintah oleh TNI dan kami mengatakan hal tersebut secara terbuka.*⁷⁴⁴

Dare II

588. Pada 25 - 30 Juni, Uskup Belo dan Uskup Nascimento melakukan upaya lebih lanjut untuk mempertemukan warga Timor prointegrasi dan prokemerdekaan. Pertemuan Perdamaian dan Rekonsiliasi Dare II ini diadakan di Jakarta, yang memungkinkan Xanana Gusmão ikut serta dalam pertemuan ini. Ini pertama kali sejak 1975 ia dapat bertemu dengan José Ramos-Horta yang diizinkan datang bersama-sama dengan wakil warga Timor prokemerdekaan di pengasingan. Sementara diskusi diadakan dalam suasana yang hangat, pertemuan tidak menetapkan rencana mengenai tindakan untuk melanjutkan dialog yang berkelanjutan antara berbagai pihak dalam upaya mengurangi permusuhan dan penggunaan kekerasan.

589. Serangkaian serangan milisi di Timor-Leste terjadi setelah pertemuan Dare II tersebut. Pada 29 Juni, Milisi Dadarus Merah Putih menyerang kantor UNAMET di Maliana, dan pada 4 Juli milisi Besi Merah Putih menyerang konvoi kemanusiaan antara Liquiçá dan Dili.⁷⁴⁵ Ian Martin mengatakan kepada Komisi mengenai pertemuan rutin UNAMET dengan anggota sipil dan militer Satuan Tugas Indonesia, di mana ia bersama rekan kerjanya secara terus-menerus mengungkapkan keprihatinannya. Ia mengatakan kepada CAVR bahwa pada 7 Juli, setelah serangan tersebut, ia terbang ke Jakarta untuk bertemu dengan Jenderal Wiranto untuk memberikan bukti secara langsung yang didapat PBB mengenai kaitan antara TNI dan milisi.⁷⁴⁶

590. Kekerasan dan keterlambatan yang disebabkan oleh milisi menyebabkan adanya kegiatan diplomatik yang tinggi, yang pada akhirnya berhasil memaksa pihak Indonesia untuk meningkatkan situasi keamanan di sana. Pada 12 Juli, Satuan Tugas Indonesia berkunjung ke Timor-Leste, dengan ditemani Jenderal Wiranto. Dalam beberapa hari kekerasan berkurang dan, sambil menekankan bahwa pemilihan dapat ditunda sewaktu-waktu, Sekretaris Jenderal PBB memberikan persetujuannya bahwa pemilihan dapat dilangsungkan.⁷⁴⁷

Pendaftaran pemilih

591. Kesepakatan 5 Mei menetapkan 16 Juli sebagai hari terakhir saat pendaftaran pemilih harus dimulai. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan mengadakan sidang pada September dan hanya MPR saja yang memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang tentang hasil Jajak Pendapat tersebut. Agar hal ini dapat terwujud, pemilihan harus dilaksanakan akhir Agustus. Di bawah tekanan internasional yang semakin kuat, pendaftaran pemilih dapat dimulai 16 Juli.

592. Pada 20 Juli, Sekretaris Jenderal Kofi Annan melaporkan kepada Dewan Keamanan:

Aktivitas milisi, yang telah menyebabkan banyak warga Timor mengungsi sehingga mereka tidak mendapatkan kebebasan dan keamanan, yang nyata-nyata bermaksud untuk memengaruhi pilihan politik, merupakan tantangan yang paling mendasar terhadap proses Jajak Pendapat yang bisa diterima.⁷⁴⁸

593. Sekretaris Jenderal juga mengatakan bahwa kegiatan CNRT telah dibatasi, akses bagi media independen terbatas, dan kampanye pro-otonomi telah dimulai sebelum waktu yang telah ditentukan, dan pegawai pemerintah menggunakan jabatan dan dana untuk melakukan kampanye pro-otonomi, dan pegawai negeri sipil ditekan untuk memilih pro-otonomi.⁷⁴⁹

594. Iklim ketakutan yang diciptakan oleh kelompok milisi dan kelompok pro-otonomi menyebabkan 40.000 orang mengungsi pada Juni.⁷⁵⁰ Karena terus berlangsungnya tindak kekerasan, jumlah pengungsi bertambah menjadi 60.000 pada pertengahan Juli (Lihat Bab 7.3: Pemandangan paksa dan kelaparan, seksi tahun 1999). Beberapa di antara mereka adalah pemimpin prokemerdekaan yang rumah dan desanya menjadi sasaran. Banyak pengungsi yang semata-mata menghindari tindak kekerasan dan intimidasi. Beberapa orang mencari perlindungan di kota yang agak besar di Timor-Leste, sementara yang lain mencari perlindungan ke Timor Barat. Dalam situasi keamanan yang rawan, kampanye pendidikan pemilih oleh UNAMET menekankan pada kerahasiaan pemungutan suara dan janji PBB yang akan tetap berada di Timor-Leste setelah Jajak Pendapat.

595. Meski terdapat permasalahan dan keterlambatan tersebut, pendaftaran pemilih oleh UNAMET tidak dapat mendapat hambatan, dan 451.792 pemilih bisa didaftar, baik di Timor-Leste maupun di luar negeri.* Hal ini jauh melampaui perkiraan, dan menunjukkan tekad rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib politik mereka meski harus menghadapi intimidasi dan kekerasan. Komisi pemilihan menentukan bahwa proses pendaftaran sah, yang menjadi dasar yang kuat untuk menyelenggarakan Jajak Pendapat.⁷⁵¹

Kampanye

Kelompok prokemerdekaan

596. Dalam situasi ketakutan yang secara terus-menerus diciptakan oleh milisi selama awal 1999, pimpinan CNRT memilih melakukan kampanye secara diam-diam. Mereka yakin bahwa rasa nasionalisme warga Timor yang telah dibangun selama 24 tahun masa resistansi terhadap pendudukan Indonesia membuat kampanye prokemerdekaan menjadi tidak perlu. Sebaliknya, tindakan mereka lebih

* Tempat pemungutan suara luar didirikan di lima lokasi di Indonesia, Australia, dan Eropa.

berpusat pada rekonsiliasi yang dapat menciptakan situasi yang stabil dan damai di mana UNAMET dapat menyelenggarakan pemungutan suara.

597. Pada Maret 1999, Xanana Gusmão meminta mahasiswa untuk ikut berperan sebagai motor “penggerak” kampanye, karena jika CNRT sendiri yang melakukannya akan sangat berbahaya. Pada April, kantor CNRT di Dili dihancurkan oleh milisi dan sebagian pemimpinnya bergerak secara sembunyi-sembunyi. Selama masa ini, sebanyak 800 mahasiswa kembali ke Timor-Leste dari universitas di seluruh Indonesia. Banyak kelompok mahasiswa tergabung dalam *Presidium Juventude Loriku Ass'wain Timor Lorosa'e*.⁷⁵² Banyak yang kembali ke kampung halaman mereka ataupun tinggal di Dili. Di Dili, para pelajar memfokuskan diri pada upaya mengoordinasikan kampanye informasi dan memublikasikan lambang CNRT pada kertas suara. Kegiatan mereka mencakup mendiskusikan rekonsiliasi, menyampaikan informasi terkini mengenai persiapan Jajak Pendapat, dan meneruskan perintah CNRT. Sebagai mediana adalah fotokopi buletin, karena pada awalnya pemilik percetakan tidak mau menanggung risiko untuk mencetak bahan seperti ini. Presidium juga mendirikan radio Matebian Lian (Suara Matebian), yang meskipun dicekal, masih terus mengudara.

598. Peran mahasiswa ini menanggung risiko, dan mereka menjadi sasaran selama kampanye.⁷⁵² Pada 20 Mei, Milisi Aitarak membunuh dua anggota ETSSC di Hera, yang diduga melibatkan TNI.⁷⁵³ Milisi Laksaur membunuh dua mahasiswa lagi di Covalima.⁷⁵⁴ Berdasarkan perintah CNRT, para mahasiswa tidak merespons tindak kekerasan yang dilakukan para milisi. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari meluasnya konflik di antara kelompok warga Timor yang dapat diklaim oleh TNI sebagai perang saudara.

599. Pada 1 sampai 4 Juli, Xanana Gusmão bertemu dengan delegasi CNRT di rumah tahanannya di Salemba, yang menghadiri Pertemuan Dare II di Jakarta, bersama anggota CNRT lainnya, dan membentuk tim kampanye CNRT yang bernama Komisi untuk Perencanaan dan Koordinasi Kampanye (*Comissão de Planeamento e Coordinacao de Capanha*, CPCC). CPCC bertemu di Dili 9 Juli dan merumuskan rencana kampanyenya. Kampanye ini menekankan pada kampanye diam-diam dari rumah ke rumah, khususnya dimaksudkan untuk mengenalkan lambang CNRT dan untuk membangun rasa persatuan nasional serta stabilitas. Bendera CNRT baru saja dikibarkan secara umum di Timor-Leste dan banyak warga yang belum begitu kenal dengan bendera tersebut. CPCC juga menerbitkan surat kabar *Vox Populi*, dengan oplah harian 1.300 dan membuat program radio dengan nama yang sama.⁷⁵⁵

Kelompok aktif pro-otonomi

600. Pada awal 1999 sejumlah organisasi terbentuk yang kemudian menjadi sayap politik kampanye pro-otonomi. Pada 27 Januari, Forum Persatuan, Demokrasi, dan

* Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor-Leste (ETSSC) merupakan pengecualian utama. Organisasi ini memilih tidak beraliansi dengan CNRT, yang dianggapnya terlumuri dengan politik partisan 1975.

Keadilan (FPDK) resmi berdiri, yang dipimpin Walikota Dili, Domingos Soares. Pada April, Barisan Rakyat Timor-Timur (BRTT) berdiri dan dipimpin oleh bekas Presiden UDT Fransisco Lopes da Cruz. Organisasi lainnya, Front Bersama untuk Otonomi Timor-Timur (UNIF) berdiri pada 23 Juni.

601. FPDK dan berbagai organisasi kembarannya yang semuanya pro-otonomi memiliki kaitan erat dan didanai oleh pemerintahan sipil.⁷⁵⁶ Mereka secara teratur mengikuti pertemuan tripartit militer-polisi-pemerintah (Muspida), meskipun mereka tidak punya jabatan resmi. Saat kedatangan UNAMET, kampanye gabungan kelompok pro-otonomi dan milisi telah berlangsung selama beberapa waktu. Orang-orang ditekan untuk secara terang-terangan menyatakan kesetiaannya terhadap Indonesia, dengan mengikuti unjuk rasa maupun menaikkan bendera merah-putih di depan rumah masing-masing. Satu sasaran pemaksaan ini adalah para pegawai negeri sipil. FPDK melakukan kampanye untuk mendiskreditkan UNAMET, dan kampanye tersebut dipublikasikan secara luas di Indonesia dan melalui bermacam saluran diplomatik Indonesia.⁷⁵⁷

602. Pembentukan UNIF pada 23 Juni bertujuan untuk menggabungkan berbagai kelompok pro-otonomi di bawah suatu badan, yang dipimpin oleh sejumlah pemimpin senior Timor-Timur prointegrasi. Basilio Araújo mengatakan pada Komisi:

UNIF... mencakup kami semua, dan memiliki kepemimpinan [presidium] kolektif termasuk Lopes [da Cruz, Duta Besar Khusus Indonesia dan ketua BRTT], Armindo [Soares, Ketua DPRD Timor Timur], Domingos [Soares, Walikota Dili dan Ketua FPDK], dan João Tavares [‘Kepala Komandan’ semua kelompok milisi] dari PPI, sehingga kepemimpinan kolektif merupakan kelompok tunggal, dan saya melanjutkan sebagai juru bicara kelompok ini, sementara masih menjadi juru bicara FPDK.⁷⁵⁸*

Pemerintahan sipil Indonesia di Timor-Leste

603. Pemerintahan Sipil di Timor-Leste melakukan kampanye untuk “menyosialisasikan” paket otonomi khusus, bertentangan dengan Kesepakatan Mei yang telah melimpahkan tanggung jawab tersebut hanya kepada UNAMET. Pendekatannya merupakan perpaduan antara pemaksaan dan insentif, mengambil keuntungan dari pengaruh pemerintah terhadap pegawai negeri sipil. Dalam surat edaran kepada Kepala Instansi Vertikal dan Otonomi tertanggal 28 Mei 1999, gubernur menginstruksikan bahwa pegawai negeri sipil yang terlibat aktivitas melawan pemerintah Indonesia harus dipecat.⁷⁵⁹ Pemerintah juga mendanai demonstrasi pro-otonomi di seluruh wilayah, di mana milisi bersenjata aktif bergerak dan melakukan pemaksaan pada masyarakat setempat.⁷⁶⁰

* PPI Pasukan Perjuangan Integrasi yang dipimpin oleh João Tavares; kelompok yang menjadi payung bagi disatukannya kelompok-kelompok milisi bersenjata yang lama dan yang baru muncul pada 1999.

604. Selain kegiatan kampanye, pemerintah sipil juga terlibat sangat jauh dalam mendanai dan mengorganisasikan milisi. Pada Mei Gubernur José Abilio Osorio Soares menulis kepada para bupati meminta proposal anggaran untuk Pam Swakarsa dan untuk “pengeluaran yang berkaitan...dengan rencana otonomi”.⁷⁶¹ Tiap distrik menerima bagian dari dana Program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS), yang mungkin mencakup dana dari Bank Dunia. Penyaluran dana ini disetujui oleh gubernur, dan mencakup penyaluran dana untuk polisi, yang digunakan untuk sosialisasi paket otonomi.⁷⁶²

Periode kampanye resmi

605. Kampanye secara resmi dimulai pada 14 Agustus, dan hanya berlangsung singkat. Jadwal kegiatan di seluruh negeri telah disusun melalui kerjasama dengan staf UNAMET, dalam upaya untuk mengatur berbagai rapat dan kampanye keliling guna menghindari bentrokan antara para pendukung prointegrasi dan pro-otonomi. CNRT tak dapat membuka kantornya di tiga kabupaten karena ancaman kekerasan,^{*} sedang sejumlah kantor CNRT lainnya dengan cepat menjadi sasaran dan dipaksa untuk tutup. Di antara kantor yang harus ditutup termasuk Dili pada 17 Agustus; Manatuto, 19 Agustus; dan Ainaro, 21 Agustus.⁷⁶³ Pelajar dan kelompok masyarakat sipil memainkan peran kunci dalam kampanye prokemerdekaan. Belakangan sejumlah bukti dokumenter menunjukkan bahwa TNI memasukkan CNRT, DSMPTT (Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor-Timur/ETSSC), dan OJECTIL dalam daftar ‘kekuatan musuh’-nya dalam rencana operasinya untuk referendum.^{† 764}

606. Pembunuhan terus berlanjut selama masa kampanye, terutama antara 14 dan 16 Agustus, yang membuat CNRT terpaksa mengakhiri kegiatan kampanyenya di distrik-distrik pada 19 Agustus. CNRT melakukan kampanye keliling di Dili pada 25 Agustus. Ribuan orang datang dan memberi dukungan, dan suasana di Dili ketika itu aman dan damai. Akan tetapi, kericuhan terjadi di Dili keesokan harinya, setelah kampanye terakhir oleh kelompok pro-otonomi. Delapan orang terbunuh, termasuk Augusto Guterres, pelajar yang ditembak Brimob di Becora. Malam itu, kantor Renetil dan CNRT dibakar. Gelombang kekerasan oleh para pendukung pro-otonomi menandai berakhirnya kegiatan kampanye di Dili.

Situasi keamanan memburuk: Agustus

607. Penjelasan yang dikemukakan Komandan Militer Timor-Leste Tono Suratman tentang masa kampanye menunjukkan dua hal, yaitu Indonesia bersikeras bahwa TNI telah memikul tanggung jawab keamanan meskipun ketentuan dalam Kesepakatan 5 Mei secara spesifik menugaskan polisi memikul tanggung jawab ini, dan tetap dipertahankannya gambaran bahwa apa yang terjadi di Timor-Leste adalah perang saudara dan bukannya konflik yang direkayasa:

.....
* Bobonaro, Ermera, Liquica.

† Operasi Wira Dharma 1999.

Keamanan harus dibuat kondusif sebelum referendum... Indonesia, dalam hal ini polisi dan TNI, menerapkan hal ini dan bertanggung jawab atas persoalan-persoalan dan turunannya, masalah penegakan hukum... Secara pribadi saya merasa tanggung jawab keamanan TNI sangat berat. Waktu untuk menenangkan situasi sangat singkat... sementara sejarah kekerasan antarorang Timor-Leste berumur 23 tahun, atau lebih...⁷⁶⁵

608. Selama masa kampanye, TNI bersikukuh dengan argumentasi bahwa kelompok milisi bersenjata adalah reaksi warga Timor terhadap Falintil, dengan sepenuhnya mengabaikan peran TNI dalam membentuk dan mendukung kelompok milisi bersenjata atau bahkan konflik antara TNI dan Falintil yang berlangsung selama 24 tahun.

609. Penggambaran TNI yang keliru tentang konflik yang terjadi dan penolakan atas status tentaranya membuat negosiasi untuk perdamaian dan stabilitas menjadi sulit. TNI tidak pernah sekali pun mengungkapkan kepada MLO UNAMET tentang jumlah pasukannya di wilayah tersebut.⁷⁶⁶ Menghadapi situasi ini, Xanana Gusmão sebagai Panglima Falintil menuntut pengurangan minimum pasukan TNI dan penempatan mereka di barak-barak. Sementara itu, komandan TNI, Wiranto, menuntut agar Falintil dilucuti. Meskipun TNI tidak mengurangi jumlah pasukannya, Falintil secara sepihak menarik pasukannya ke barak-barak untuk membuktikan bahwa Falintil bukanlah sumber kekerasan yang terjadi dan mendesak TNI untuk menanggapi dengan mundur ke barak dan melucuti para milisi. Pada 12 Agustus, ke-670 prajurit Falintil telah berada di barak-barak mereka.*

610. Meski demikian, TNI tidak menarik mundur pasukannya ke berbagai barak di tingkat kabupaten, dan anggota milisi tetap menebar ancaman dengan bebas di tengah-tengah masyarakat di seluruh wilayah Timor. Berhari-hari setelah kelompok Falintil mengurung diri di barak-barak mereka, para pemimpin milisi mengumumkan bahwa mereka akan meletakkan senjata. UNAMET menyaksikan upacara penyerahan senjata oleh milisi kepada polisi di empat kabupaten antara 16 dan 19 Agustus. Tapi, UNAMET menyaksikan bahwa jumlah senjata yang diserahkan itu "hanyalah sebagian kecil dari yang sebenarnya dimiliki oleh milisi."⁷⁶⁷

611. Meskipun para pemimpin prointegrasi menuduh Falintil sering bertindak melampaui batas selama periode tersebut, investigasi UNAMET jarang menemukan bukti atas tuduhan-tuduhan tersebut. Hanya dua kejadian kekerasan yang dilakukan oleh prokemerdakaan dapat dibuktikan. Dalam satu insiden, seorang pendukung kemerdekaan membunuh seorang pendukung prointegrasi pada 12 Juli, dan seorang anggota milisi Aitarak dibunuh di Becora pada 29 Agustus.⁷⁶⁸

* Keempat lokasi pengurangan diri Falintil adalah Uaimori (260 prajurit), Atalari, Baucau (70 prajurit), Poetete, Ermera (153 prajurit), dan Aiasa, Bobonaro (187 prajurit). Petugas Perantara Militer UNAMET menyaksikan keempat lokasi tersebut dan bertemu dengan para prajurit Falintil. [Lihat Martin, *Self-Determination*, hal. 73.]

612. Selain berperan dalam Satuan Tugas Pelaksanaan Musyawarah Umum di Timor-Leste, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim tampaknya dipercaya dengan tugas menjalankan kampanye militer.⁷⁶⁹ Pada 18 Agustus Delegasi Kongres Amerika Serikat menyaksikan terjadinya tindak kekerasan di Suai dan kesaksian mereka kemudian berakibat pada dicopotnya Makarim dari jabatannya, termasuk Komandan Kodim di Bobonaro dan Covalima. Balibó Alasan di balik pencopotan ini adalah, beberapa prajurit secara terpisah bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang terjadi, suatu pendekatan yang samasekali tidak membantu mengendalikan tindakan melebihi batas yang dilakukan oleh TNI sebagai lembaga. Pada 13 Agustus, Kolonel Tono Suratman diganti oleh Komandan Korem yang baru yang berlatarbelakang Kopassus, Kolonel Noer Muis.⁷⁷⁰

613. Pada 24 Agustus, Sekretaris Jenderal PBB memberikan sambutannya di hadapan Dewan Keamanan, dengan mengutip pernyataan Komisi Elektoral independen, bahwa masa pemilihan “tak pernah lepas dari intimidasi, kekerasan, atau gangguan (sebagaimana yang disyaratkan dalam Kesepakatan 5 Mei)”⁷⁷¹

Persiapan terakhir Jajak Pendapat

614. Masa kampanye formal berakhir pada 26 Agustus. UNAMET mempekerjakan 4.000 warga Timor untuk membantu pelaksanaan Jajak Pendapat di 200 TPS di seluruh negeri.⁷⁷² Semua staf diminta untuk bersikap netral secara politis dan diatur oleh staf pemilihan internasional. Kelompok-kelompok pengamat dan media massa internasional tiba dalam jumlah besar beberapa hari menjelang 30 Agustus, guna memastikan bahwa pemungutan suara berjalan di bawah pengawasan masyarakat internasional.

Jajak Pendapat

615. Tanggal 30 Agustus 1999 menandai dimulainya hari bersejarah di Timor-Leste. Meski mengalami intimidasi dan kekerasan selama berbulan-bulan, pada hari itu rakyat di seluruh negeri keluar rumah dengan penuh semangat untuk memberikan suara mereka. Banyak yang berbondan dengan memakai pakaian terbaik mereka. Dan di desa-desa, orang berjalan kaki selama berjam-jam untuk memberikan suara. Menjelang fajar, 50% rakyat yang telah mendaftar untuk memilih, telah menunggu di luar TPS-TPS yang tersedia, untuk memberikan suara.⁷⁷³ Orang-orang menunggu dengan sabar dalam antrian panjang di sebagian besar TPS, dan segera pulang setelah selesai memilih. Sejumlah TPS dibuka sejak pukul 06.30 hingga pukul 16.00, meskipun di beberapa tempat Jajak Pendapat telah selesai dilakukan menjelang sore.

616. Pengamat dan media internasional mengomentari semangat dan martabat rakyat Timor, yang setelah mengalami kekerasan selama 24 tahun tidak membiarkan intimidasi dalam beberapa bulan terakhir mencegah mereka menggunakan hak mereka untuk menentukan masa depan mereka. Rakyat Timor memberikan suara dalam jumlah besar, yaitu 98,6% dari jumlah keseluruhan yang mendaftar. Berbeda dengan suasana pada 26 Agustus yang penuh kekerasan, hari itu suasana tenang di

sebagian wilayah. Meski begitu, milisi membunuh dua staf lokal UNAMET di Atsabe. Seorang saksi dari Civpol (Polisi sipil PBB) melihat TNI di tempat kejadian.⁷⁷⁴

617. Segera setelah pemungutan suara selesai, sebelum penghitungan dan pengumuman hasil, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, menegaskan pandangan Pemerintah Indonesia bahwa pemungutan suara tersebut sah:

Saya sangat berbesar hati dan senang hati mengatakan bahwa [pemungutan suara tersebut] sungguh berjalan bebas dan damai, dan karenanya keputusan yang adil dari Jajak Pendapat.⁷⁷⁵

618. Namun Juru Bicara prointegrasi Basilio Araújo mengeluarkan daftar 37 pelanggaran yang diduga dilakukan oleh staf UNAMET dan mengklaim bahwa pemungutan suara tersebut tidak adil. Komisi Pemilihan menanggapi protes para pendukung prointegrasi dengan mengadakan musyawarah selama satu setengah hari pada 2 - 3 September. Komisi Pemilihan akhirnya menyimpulkan:

Apapun kebenaran yang mungkin ada dalam pengaduan oleh orang per orang tentang dugaan pelanggaran dan/atau keberpihakan yang dilakukan oleh staf pemilihan, tak satu pun dari pengaduan tersebut, baik secara perorangan maupun kelompok, menggagalkan proses tersebut.⁷⁷⁶

Penghitungan dan hasil

619. Untuk memastikan kerahasiaan pemungutan suara, kertas suara dihitung di Dili. Sore hari, pada 30 Agustus, staf UNAMET dari berbagai tempat pemungutan suara membawa kertas suara ke markas kabupaten di bawah pengawasan polisi PBB. Semua kertas suara tersebut disimpan di bawah penjagaan ketat polisi PBB, dan dibawa ke pusat penghitungan di Dili dengan helikopter atau konvoi darat oleh staf UNAMET dan polisi PBB pada 31 Agustus. Di Maliana, helikopter yang mengangkut kertas suara ditembak, dan di Gleno dan Atsabe di Distrik Ermera, tim UNAMET yang membawa kotak suara mendapat intimidasi dari kelompok milisi.⁷⁷⁷ Penghitungan dilakukan secara terpusat di Dili. Tidak ada laporan hasil tersendiri dari kabupaten dan daerah, yang ada hanya hasil tunggal untuk seluruh wilayah pemilihan. Ini dilakukan untuk menjamin keamanan di berbagai daerah yang mungkin menjadi sasaran kekerasan karena afiliasi politik mereka dan juga untuk membantah saran gerakan pro-otonomi agar wilayah bisa saja dibagi agar mencerminkan hasil regional.

620. Di pusat penghitungan, yaitu di Museum Dili di Comoro, petugas pemilihan UNAMET di seluruh Timor berkumpul untuk melakukan penghitungan. Para pengamat internasional termasuk delegasi resmi dari Indonesia dan Portugis, memiliki akses masuk ke pusat penghitungan dan turut menyaksikan seluruh tahapan proses penghitungan. Banyak kontingen media internasional meninggalkan Timor-Leste segera setelah pemilihan yang berjalan damai itu selesai. Begitu juga para pengamat internasional.

621. Kerusuhan yang didalangi oleh kelompok milisi pecah beberapa hari setelah Jajak Pendapat. Pada 1 September, kelompok milisi tiba di Dili dan melancarkan serangan terhadap para pendukung prokemerdekaan yang lokasinya berdekatan dengan gedung UNAMET di Balide. Media internasional berhasil mengambil gambar seorang pria yang sedang berlari menyelamatkan diri namun tertangkap dan dicincang hingga tewas oleh milisi. Ratusan warga mengungsi di sekolah yang terletak di sebelah gedung UNAMET. Di Ermera, kerusuhan pecah, dan UNAMET mengevakuasi stafnya ke Dili. Pada 2 September di Maliana, milisi mengepung kantor UNAMET dan melancarkan tembakan dan membakari rumah-rumah. Dua orang staf UNAMET dari Timor tewas.

622. Penghitungan suara terus berlanjut tanpa henti, di tengah-tengah situasi keamanan yang kian memburuk. PBB bertekad untuk mengumumkan hasil pemungutan suara secara bersamaan, masing-masing oleh Sekretaris Jenderal PBB di New York pada tengah malam 3 September dan oleh Perwakilan Khusus PBB di Dili, Ian Martin, pada pagi hari 4 September. Setelah berkonsultasi dengan Satuan Tugas Indonesia, pengumuman pada pagi hari di Dili dianggap dapat memberikan kontrol yang lebih baik bagi situasi keamanan pada jam-jam berikutnya.⁷⁷⁸

623. Pada pukul 9 pagi, Sabtu 4 September, Ian Martin membacakan hasil pemungutan suara di Hotel Mahkota di Dili: 21,5% memilih paket otonomi khusus dan 78,5%menentanginya. Komisi Pemilihan telah pula menyiapkan pertimbangan akhir mengenai pemungutan suara:

Komisi dapat menyimpulkan bahwa Jajak Pendapat telah terlaksana dengan adil menurut prosedur dan sesuai dengan Perjanjian New York, dan telah secara akurat mencerminkan keinginan rakyat Timor. Tidak diragukan lagi bahwa mayoritas rakyat di daerah konflik ini ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia.⁷⁷⁹

Indonesia meninggalkan Timor-Leste: Bumi Hangus

Tinjauan

624. Dengan diumumkannya hasil pemungutan suara, PBB meminta Indonesia untuk memastikan situasi keamanan di wilayah Timor.⁷⁸⁰ Tekanan diplomatik pun digunakan untuk memastikan tercapainya tujuan akhir ini, namun ketentuan untuk memberi perlindungan kepada rakyat Timor-Leste tetap tak mencukupi. Kejadian pada September dan Oktober 1999 menjadi pembahasan dua proses hukum dan sejumlah laporan investigasi, baik oleh warga Timor-Leste dan Indonesia, serta organisasi dan lembaga internasional, termasuk PBB.*

* Komisi Para Ahli PBB 1999 - 2000, Unit Kejahatan Berat dan panel hakim di Timor-Leste, Pengadilan Ad Hoc HAM di Jakarta, laporan KPP-HAM Indonesia dan laporan Profesor Geoffrey Robinson untuk Komisi

625. Militer Indonesia dan milisi diketahui telah membunuh antara 1.200 hingga 1.500 warga Timor-Leste pada 1999; 900 orang di antaranya dibunuh setelah Jajak Pendapat. Masing-masing mereka membunuh 400 orang lewat pembunuhan massal, dan sisanya dibunuh secara terpisah.⁷⁸¹ Para korban tersebut tewas dengan cara yang mengesankan, banyak yang ditebas dengan golok, dan di antara mereka yang sempat menyelamatkan diri, banyak yang kehilangan anggota tubuhnya dan menderita gangguan kesehatan yang berkepanjangan. Secara khusus, para pembunuh itu mengincar dan mengeksekusi para pemimpin CNRT dan keluarga mereka.⁷⁸² Penganiayaan, kekerasan seksual, dan pemindahan warga secara paksa terjadi di seluruh wilayah Timor-Leste.⁷⁸³ Lebih daripada separuh penduduk, yaitu 550.000 orang, melarikan diri dari rumah mereka, termasuk 250.000 orang yang dipaksa atau diintimidasi untuk pindah ke Timor Barat.⁷⁸⁴ [Lihat Bab 7.3.: Pemindahan paksa dan kelaparan]. Milisi juga membunuh warga yang mencari perlindungan di gereja. Para pastor dan para biarawati juga menjadi sasaran pembunuhan. TNI dan milisi bekerja sama untuk menerapkan strategi kekerasan massal di seluruh wilayah Timor-Leste.

626. Perhatian dunia terpusat pada markas UNAMET di Dili, tempat mengungsi beberapa staf UNAMET dan wartawan internasional yang masih tersisa di wilayah tersebut. Kegiatan diplomasi yang sangat gencar terjadi di belakang layar dan kadang-kadang di depan umum untuk menekan Indonesia agar memenuhi kewajibannya menjaga keamanan atau menyetujui kedatangan pasukan internasional untuk memulihkan situasi keamanan di Timor-Leste. Tidak satu negarapun mau bertindak melindungi rakyat Timor-Leste tanpa persetujuan dari Indonesia. Para pemimpin Timor-Leste berupaya meyakinkan negara-negara kuat di dunia dan di wilayah ini agar mau melakukan intervensi demi menyelamatkan rakyat Timor-Leste. Di PBB, di KTT APEC yang diadakan di Selandia Baru, di Portugal dan Roma, di Jakarta dan Australia, para pemimpin itu tidak berhenti bekerja.

627. Karena TNI menunjukkan sikap enggan mengendalikan kerusuhan yang terjadi, sementara tim Dewan Keamanan telah berada di Dili dan Jakarta, pada 12 September Presiden Indonesia Habibie, akhirnya menyetujui hadirnya pasukan internasional. Seminggu kemudian, komandan Pasukan Internasional untuk Timor-Leste atau Interfet asal Australia, Mayor Jenderal Peter Cosgrove, tiba di Dili, yang diikuti oleh pasukannya sehari kemudian. Saat TNI meninggalkan Timor-Leste, mereka menghancurkan 70% infrastruktur utama, rumah-rumah, dan bangunan, mereka juga menghancurkan seluruh desa dan menjarah harta benda rakyat Timor-Leste.⁷⁸⁵

628. Xanana Gusmão kembali ke Timor-Leste pada 22 Oktober, dan pada 25 Oktober Dewan Keamanan PBB membentuk Pemerintahan Transisi PBB atau UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor), yang dipimpin oleh Sérgio Vieira de Mello. Tugas menangani krisis kemanusiaan dan membangun kembali negara Timor-Leste yang tercabik-cabik, telah menunggu.

Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mungkin merupakan laporan terbaru yang terpenting sampai saat ini.

* Dokumen yang terakhir ini dikirimkan sebagai submisi untuk CAVR oleh Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Tindak kekerasan sesudah pengumuman hasil pemungutan suara

629. Tindak kekerasan pasca-Jajak Pendapat yang mulai terjadi pada 30 Agustus sore hari dan terus berkembang selama hari-hari penghitungan suara semakin meningkat setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat pada 4 September. Di Dili, karena takut akan ancaman adanya pembalasan terhadap mereka yang memilih prokemerdekaan, rakyat berduyun-duyun pergi ke Dare di kaki bukit di belakang kota untuk mengungsi di berbagai tempat seperti markas ICRC, rumah Uskup Belo, dan kompleks keuskupan Dili, dan sekolah yang terletak di sebelah markas UNAMET. Sementara staf UNAMET pindah ke markas Balide setelah hasil Jajak Pendapat diumumkan.

630. Pada 5 September, Milisi Aitarak, TNI, dan polisi, menyerbu kantor keuskupan Dili, memisahkan dengan paksa staf UNAMET orang Timor dan anggota CNRT, dan membunuh antara 15 dan 20 dari 300 orang yang mengungsi di tempat tersebut.⁷⁸⁶ Militer memindahkan wartawan yang tersisa dan menyelamatkan para pengungsi lokal ke markas Balide, tempat orang-orang internasional berkumpul hingga evakuasi mereka. Pada 6 September kelompok milisi dengan sangat kejam memaksa keluar 7.000 orang yang sedang mengungsi di dalam markas ICRC dan di rumah Uskup Belo yang terletak di tepi pantai Dili, yang kemudian mereka hancurkan. Belakangan, orang-orang tersebut dibawa ke Timor Barat sebagai bagian dari rencana darurat yang disebut Hanoin Lorosae II (Operasi Mengenang Lorosae II) yang disusun oleh polisi beberapa bulan sebelumnya, sebagaimana disebutkan di atas. (Lihat paragraf 561.)

631. Pada hari yang sama di pantai selatan Suai, milisi Laksaur, dengan disaksikan pemerintah daerah dan polisi daerah serta pemimpin militer, membunuh antara 27 dan 200 orang dari 2.000 pengungsi yang tersisa di dalam gereja.⁷⁸⁷ Di antara mereka yang pertama kali dibunuh adalah tiga Pastor Katolik, yang ditebas dengan golok oleh anggota milisi. Penggalan tubuh korban yang dilakukan kemudian menunjukkan di antara yang terbunuh itu terdapat wanita dan anak-anak.⁷⁸⁸ Penyelidikan dan kesaksian dari para saksi menunjukkan adanya keterlibatan pasukan teritorial TNI.⁷⁸⁹

632. Pembunuhan Pastor Katolik menandakan bahwa Gereja Katolik menjadi sasaran. Gereja telah lama mempunyai hubungan yang tegang dengan otoritas Indonesia yang berkuasa, tetapi hingga kerusuhan pasca-Jajak Pendapat, anggota gereja belum pernah menjadi sasaran pembunuhan. Hari-hari setelah penyerangan di Suai, tindakan menjadikan Pastor Katolik sebagai sasaran tampaknya menjadi pola yang juga terlihat di distrik-distrik lain. Komisi mendengar kesaksian oleh saksi mata tentang para pastor yang sengaja dijadikan sasaran ketika mereka mencoba mencegah terjadinya kekerasan:

Saya melihat Padre Francisco mengangkat tangan dan berkata kepada Milisi Laksaur/Mahidi, "Cukup. Berhenti menembak. Kita semua orang Timor. Hentikan ini semua." Dia berteriak karena melihat begitu

banyak korban yang jatuh, tetapi milisi Laksaur/Mahidi mengabaikan permintaan beliau. Kemudian salah satu anggota milisi... mendekati Padre. Dia pura-pura memeluk Padre, kemudian membawa beliau dari tempat tinggalnya ke Gua Maria dan kembali lagi. Kemudian dia menembak Padre Francisco, tetapi beliau tidak langsung meninggal, jadi dia mengambil pedangnya dan menikam beliau satu kali di dada. Padre Francisco meninggal saat itu juga.⁷⁹⁰

633. Ketika ketegangan dan kekerasan meningkat di seluruh negeri, orang-orang melarikan diri dari rumah-rumah mereka mencari keselamatan di sejumlah hutan dan gunung. Ribuan orang berjejal mencari perlindungan di berbagai barak pertahanan Falintil.

634. Secara umum, tindak kekerasan yang dilakukan oleh TNI dan milisi paling parah terjadi di beberapa distrik di bagian barat. Di distrik-distrik tersebut, dekat dengan perbatasan Timor Barat di mana jumlah Falintil lebih sedikit, hubungan TNI dan milisi justru paling kuat. Pada 7 September, Wakil Komandan Falintil Taur Matan Ruak merasa sangat putus asa, dan mengancam akan melancarkan pembalasan dari markasnya di Uaimori. Berbicara dengan Taur Matan Ruak melalui telepon satelit, Xanana Gusmão melarangnya melakukan tindakan balas dendam tanpa memedulikan jumlah nyawa dan penderitaan, dengan alasan bahwa setiap tindakan balas dendam akan menciptakan perang saudara yang memang telah lama dicoba direkayasa oleh TNI, apalagi jika harus kehilangan dukungan internasional yang merupakan satu-satunya harapan untuk selamat.⁷⁹¹ Sikap disiplin Falintil secara umum tetap utuh meskipun ada begitu banyak provokasi. Sejumlah pembunuhan yang dilakukan oleh para pendukung kemerdekaan atau anggota Falintil yang dilaporkan terjadi pasca-Jajak Pendapat, kebanyakan terjadi di distrik-distrik di bagian barat.⁷⁹²

TNI resmi mengambil kendali

635. Pada 4 September TNI melakukan reorganisasi kepemimpinan di Timor di bawah komando Mayor Jenderal Adam Damiri dari Kodam IX Udayana, yang mengambil kendali secara resmi dari pihak polisi. Pada 5 September, Jenderal Wiranto bertemu dengan para milisi dan pimpinan TNI di Timor-Leste, dan kemudian dengan Uskup Belo, yang meminta agar Wiranto mengendalikan para milisi.⁷⁹³ Pada 6 September, Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal Jamsheed Marker mendesak agar pihak Indonesia mengundang pasukan internasional, namun permintaan ini ditolak dengan keras. Presiden Habibie mengumumkan pemberlakuan darurat militer pada hari berikutnya, dengan menunjuk Mayor Jenderal Kiki Syahnakri sebagai Komandan. Ia kemudian menggantikan satuan teritorial dengan pasukan Kostrad, teori yang ada adalah tentara teritorial ini telah bertindak karena hubungan emosi dengan wilayah tersebut dan tentara baru diharapkan dapat bertindak dengan cara yang lebih profesional.

636. Kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi setelah TNI mengambil alih kendali secara resmi. Berbagai serangan ini mengikuti pola pembunuhan yang sama oleh milisi yang melibatkan TNI, sering disaksikan langsung oleh personel senior TNI. Banyak pembunuhan memiliki pola yang sama: sejumlah pembunuhan itu terjadi setelah meningkatnya kekerasan, dengan sasaran para individu yang telah dipilih, dan mereka mempunyai kesamaan prosedur yang berlanjut dengan pembuangan mayat secara sistematis dengan menggunakan truk sehingga semua bukti menunjukkan adanya dukungan oleh pihak militer.⁷⁹⁴ Pola yang lain termasuk persenjataan, yang mengandalkan senjata rakitan, pisau, pedang, dan beberapa senjata otomatis.⁷⁹⁵ Ancaman, pemukulan, perkosaan, dan pembakaran rumah yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya kini dilakukan secara sistematis dalam skala besar. Milisi membakar Timor-Leste dengan bensin yang disediakan oleh militer, yang sering dibawa dengan mobil pemadam kebakaran tetapi tangki kendaraan diisi dengan bensin. Mereka mengangkut barang-barang hasil jarahan ke atas truk-truk militer. Tidak mungkin pemenuhan kebutuhan logistik yang luarbiasa banyaknya ini terjadi tanpa keterlibatan TNI.⁷⁹⁶

637. Komisi juga menerima submisi yang berisi kesaksian tentang artefak budaya Timor- Leste yang tak bernilai yang telah dibawa oleh pejabat Indonesia dari gedung yang dikenal sebagai Museum Dili di Comoro selama kekerasan pada September 1999.⁷⁹⁷ Museum tersebut telah dibuka oleh pejabat Indonesia pada 1995 dan menyimpan lebih daripada 3.000 objek, termasuk tais kuno, keramik tradisional, keranjang tradisional, serta pahatan di batu dan kayu yang dikeramatkan. Submisi ini mengutip hasil wawancara dengan Virgilio Simith, anggota senior CNRT pada 1999 yang bertanggung jawab untuk Urusan Kebudayaan. Pada susunan Kabinet pertama RDTL setelah 20 Mei 2002, Virgilio Simith adalah Sekretaris Negara untuk Budaya, Pemuda, dan Olahraga. Virgilio mengatakan bahwa kebanyakan objek-objek tersebut telah dibawa ke museum di Kupang, dan terdapat sekitar 68 kain tais Timor. Dia menuturkan bahwa selama perundingan untuk isu-isu tidak terbahas antara Indonesia dan Timor-Leste selama masa Administrasi UNTAET, perwakilan Indonesia telah menjelaskan bahwa dipindahkannya artefak-artefak tersebut “karena tidak menentukannya suasana politik di Timor-Leste, sehingga objek-objek tersebut ‘diamankan.’” Namun, Virgilio mengatakan bahwa dia mengerti bahwa para pejabat di Kupang tetap menjaga objek-objek tersebut yang “dibeli dengan dana dari Indonesia dan oleh sebab itu menjadi bagian dari hak milik Indonesia”. Virgilio Simith mengatakan bahwa dia percaya banyak objek, khususnya tais telah dijual di beberapa kota Indonesia, seperti Ubud, di Bali sejak 1999.⁷⁹⁸

638. Kekerasan dan perbudakan seksual meluas pada masa ini. Komisi mendengar khususnya dari banyak perempuan di Suai yang menceritakan pengalaman mereka setelah terjadinya pembantaian massal di gereja pada 6 September, ketika mereka dibawa ke dekat sekolah dan diperkosa berulang kali sebelum dipaksa melewati perbatasan. Banyak juga yang ditahan sebagai budak pemuas nafsu seksual.⁷⁹⁹

639. Pembunuhan yang terjadi pada 8 September di Maliana menggambarkan pola tersebut dengan baik. Setelah kekerasan meningkat, truk TNI membawa milisi

ke kantor Polres, yang menjadi tempat mengungsi ratusan orang. Di hadapan petugas TNI dan polisi, milisi memilih dan mengeksekusi 13 pimpinan CNRT di antara mereka yang mencari perlindungan itu.⁸⁰⁰ Tiga belas orang yang lolos dari pembunuhan massal diburu dan dibunuh dengan golok pada hari berikutnya. Beberapa hari kemudian insiden yang serupa terjadi jauh dari pengetahuan orang lain, di daerah terisolasi yakni Distrik Oecussi. Milisi Sakunar memisahkan dan membunuh pimpinan CNRT di Passabe. Setelah itu, diperkirakan sebanyak 170 orang terbunuh pada bulan setelahnya, korban terakhir dibunuh hanya dua hari sebelum tibanya pasukan Interfet yang terlambat di distrik tersebut.⁸⁰¹

Markas UNAMET

640. Sementara kekerasan terus terjadi di daerah tersebut, personel UNAMET yang tidak bersenjata mengungsi ke markas regional mereka. Ian Martin bersaksi di hadapan Komisi mengenai situasi di markas selama periode ini, dan mengenai usaha-usaha PBB untuk mengupayakan campur tangan internasional. Ia menceritakan tentang serangan langsung terhadap personel dan kantor UNAMET di distrik, serta keputusan untuk menarik tim regional UNAMET ke markas Dili. Seorang polisi PBB ditembak oleh milisi dengan menggunakan senjata berdaya ledak tinggi di Liquiçá dan hanya diselamatkan oleh jaket anti peluru yang dikenakannya; di Baucau polisi menembakkan senjata api otomatis selama lebih daripada dua puluh menit setinggi dada ke kantor UNAMET, tempat lebih dari 70 staf mengungsi. Ketika staf kantor regional Baucau dievakuasi ke lapangan udara, TNI dan milisi berusaha mencegah dilakukannya evakuasi staf UNAMET yang asal Timor ke Dili. Pada 5 September, sebagian besar tim regional UNAMET telah menarik diri dari distrik ke Markas Dili. Ia mengingat bahwa staf UNAMET asal Timor menjadi sasaran khusus, dan menceritakan hal itu kepada Komisi:

Staf lokal UNAMET termasuk orang-orang pertama yang dibunuh setelah TPS ditutup dan di hari-hari sesudahnya. Lima belas staf UNAMET orang Timor diketahui atau dipercaya kehilangan nyawa mereka... Saya memohon pada Komisi untuk mencatat keberanian yang ditunjukkan oleh staf lokal UNAMET; tanpa jasa mereka PBB tidak akan bisa memenuhi mandatnya untuk menjalankan pemilihan.⁸⁰²

641. Staf UNAMET terperangkap di markasnya di Balide. Tim yang meninggalkan markas di Dili untuk mencari makanan dan minuman di gudang UNAMET, ditembaki. Segelintir orang asing yang masih di Dili melarikan diri ke markas ini, bersama sejumlah orang Timor yang mencari tempat perlindungan. Pada 5 September, tembakan senjata otomatis yang terjadi secara terus-menerus terdengar dari dekat markas dan setelah dua puluh menit serangan, orang-orang dalam jumlah besar yang mencari perlindungan di sekolah mulai melompati tembok berkawat menuju markas UNAMET. Ada sekitar 1.500 orang dalam kelompok ini. Ini berarti terdapat lebih daripada 3.000 orang yang berada di markas UNAMET, dengan sedikit makanan dan air, serta kondisi kebersihan yang sangat kurang.

642. Pada 6 September, selain staf Gereja, tidak ada lagi orang asing di Timor-Leste di luar markas UNAMET. TNI mengepung markas tersebut, sehingga mereka berhasil melakukan langkah pertama untuk menutup Timor-Leste dari dunia luar. Di antara yang terperangkap di markas adalah beberapa wartawan internasional. Dengan menggunakan telepon genggam dan sambungan satelit, mereka menceritakan keadaan ke seluruh dunia. Namun, sementara media dunia terfokus pada masalah pengepungan markas UNAMET di Dili, media tidak mempunyai foto tentang kekerasan dan perusakan sistematis yang terjadi di seluruh daratan Timor-Leste.

Meningkatnya tekanan internasional

643. Para tokoh Timor-Leste yang berada di luar sangat sibuk melakukan aktivitas diplomasi untuk meminta campur tangan internasional. Xanana Gusmão akhirnya dibebaskan dari penjara oleh pemerintah Indonesia pada 7 September, dan diserahkan kepada UNAMET di Jakarta. Untuk menghindari adanya upaya pembunuhan, ia dibawa ke Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, kemudian dari sini diterbangkan ke Darwin, Australia. Uskup Belo dievakuasi ke Baucau setelah tempat tinggalnya diserang, dan dari sana ia kemudian diterbangkan ke Darwin pada 7 September dengan menggunakan pesawat udara milik PBB. Ia terbang ke Roma dan Lisbon untuk mencari dukungan. José Ramos-Horta dan yang lainnya pergi ke Auckland, Selandia Baru, di mana para pemimpin regional dan dunia berkumpul untuk mengikuti pertemuan tahunan APEC. Di seluruh dunia, khususnya di Australia dan Portugal, demonstrasi massa, yang digerakkan oleh gerakan solidaritas nonpemerintah dan orang-orang Timor yang berada di pengasingan, mengusahakan campur tangan internasional. Lewat foto-foto yang kuat kesannya walau terbatas jumlahnya dari markas UNAMET di Dili, dan pesan dari wartawan serta orang-orang lain di markas tersebut, informasi mereka mendominasi berita internasional dan terus menekan Indonesia dan meminta pemimpin dunia untuk melakukan campur tangan.⁸⁰³

644. Sekjen PBB, Kofi Annan, melakukan diplomasi pribadi yang sifatnya mendesak. Upaya pertamanya bertujuan meminta Indonesia untuk memenuhi kewajiban keamanan. Melalui sambungan telepon langsung Presiden Habibie pada 5 September menentang gagasan Sekjen PBB untuk melibatkan pasukan pemelihara perdamaian internasional, dan sebagai pengganti mengeluarkan Keppres pemberlakuan darurat militer di wilayah ini. Sekjen PBB meningkatkan tekanan pada Indonesia dengan mengumumkan kepada publik bahwa tindakan lebih lanjut harus dipertimbangkan jika keadaan tidak membaik di Timor-Leste dalam jangka waktu 48 jam.⁸⁰⁴

645. Sebelum diadakan Jajak Pendapat, dan sekali lagi pada 1 September, Portugal meminta pengerahan pasukan perdamaian internasional. Australia telah melakukan persiapan secara diam-diam sejak akhir 1998. Selandia Baru juga mempersiapkan diri. Namun, tidak ada satu negarapun yang siap melakukan intervensi militer tanpa seizin Indonesia.⁸⁰⁵ Pada 4 September, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer mengumumkan secara terbuka keinginannya untuk memimpin pasukan internasional

ke Timor-Leste, jika Indonesia setuju dan jika Australia menerima mandat dari Dewan Keamanan PBB. Sekjen PBB Kofi Annan dan Perdana Menteri Australia John Howard mengadakan kontak secara terus-menerus untuk mengupayakan hal ini, mencari persetujuan Indonesia atas pengiriman pasukan internasional dan pengumpulan koalisi untuk membentuk pasukan yang dapat ditempatkan segera.

646. Pada 5 September, Dewan Keamanan PBB mengirim misi ke Jakarta dan Timor-Leste.⁸⁰⁶ Utusan ini meninggalkan New York pada 6 September, diiringi oleh Francesc Vendrell, Utusan Pribadi Sekjen PBB. Utusan ini mulai mengadakan pertemuan pada 8 September. Mereka bertemu dengan Presiden Habibie, Megawati Sukarnoputri, yang mungkin menjadi calon pengganti Habibie; seorang staf delegasi UNAMET yang telah meninggalkan markas Dili dan langsung terbang ke Jakarta; serta Jenderal Wiranto. Mereka juga bertemu dengan Xanana Gusmão, yang baru saja dibebaskan. Utusan ini mendesak agar mereka dapat terbang menuju Timor-Leste.

647. Pada 10 September, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Mary Robinson, terbang ke Darwin untuk menemui staf UNAMET asal Timor dan pengungsi yang telah dievakuasi. Ia berbicara kepada publik tentang perlunya pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk dibawa ke pengadilan.⁸⁰⁶

648. Sementara itu, berkumpulnya para pemimpin politik dan ekonomi dunia dalam pertemuan puncak APEC secara tidak sengaja menjadi ajang yang baik untuk membicarakan situasi Timor-Leste. Pernyataan yang berpengaruh datang dari Bank Dunia dan IMF. Presiden Bank Dunia James Wolfensohn menulis langsung kepada Presiden Habibie pada 8 September yang menekankan perlunya Indonesia memulihkan keamanan dan ketertiban serta menghormati hasil Jajak Pendapat. Indonesia, masih rentan dari segi ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Asia pada 1997, semakin mendapatkan banyak tekanan. Ketika Presiden Amerika Serikat tiba di pertemuan puncak APEC pada 11 September, ia mengumumkan penangguhan penjualan senjata ke Indonesia. Inggris dan Uni Eropa juga mengumumkan hal yang sama.

649. Pada 11 September Misi Dewan Keamanan PBB terbang ke Dili. Jenderal Wiranto terbang ke Timor-Leste mendahului Misi PBB tersebut. Ketika utusan tiba, situasi Dili relatif tenang, yang menunjukkan kemampuan TNI untuk menjaga keamanan apabila ia memilih untuk melakukannya.⁸⁰⁷ Misi Dewan Keamanan ini mendapat penjelasan singkat di markas TNI, dan bertemu dengan staf UNAMET serta orang-orang Timor-Leste yang terusir yang berada di markas tersebut. Misi ini kembali ke Jakarta pada hari itu juga, karena Dewan Keamanan sedang mengadakan rapat di New York untuk membahas situasi di Timor-Leste. Rapat Dewan Keamanan berakhir hampir enam jam, dengan lima puluh delegasi yang turut berbicara.⁸⁰⁸ Dukungan bagi intervensi internasional di Timor-Leste menjadi tinggi, dengan banyak negara yang meminta persetujuan Indonesia atas tindakan ini.

* Kelima anggota utusan adalah Martin Andjabal dari Namibia, Duta Besar Jeremy Greenstock dari Inggris, Dubes Danilo Türk dari Slovenia, Dubes Hasmy Agam dari Malaysia, dan Menteri Alphons Hamer, Wakil Presiden Dewan Keamanan dari Belanda.

650. Pengasingan Indonesia karena kejadian di Timor-Leste benar-benar mencapai puncaknya. Pada 12 September, dengan Misi Dewan Keamanan masih berada di Jakarta, Presiden Habibie mengadakan rapat Kabinet. Setelah itu, ia menelepon Sekretaris Jenderal PBB untuk meminta bantuan guna memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor-Leste, dan segera setelah itu mengumumkan hal ini melalui saluran TV dan radio nasional Indonesia.

651. Dengan mendapat izin dari Indonesia, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1264 (1999) pada tanggal 15 September, yang memberikan mandat kepada pasukan multinasional dengan kekuasaan Bab VII penuh untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor-Leste. Ian Martin memberikan kesaksian kepada Komisi bahwa hanya setelah adanya komitmen internasional inilah ia kemudian membuat keputusan untuk menutup markas UNAMET Dili. Ia menjelaskan kepada Komisi bahwa sebelumnya, pada 8 September, ia menyarankan agar UNAMET menarik diri tetapi pertemuan dengan staf senior menunjukkan bahwa mereka bersedia tinggal selama orang Timor-Leste bersama mereka di markas.⁸⁰⁹ Pada 10 September, evakuasi pertama memindahkan sebagian besar staf UNAMET, termasuk beberapa staf asal Timor, meninggalkan 80 sukarelawan untuk tinggal bersama orang Timor-Leste yang mencari perlindungan di markas. Banyak di antara mereka adalah staf Jajak Pendapat UNAMET lokal, dan pasti akan dijadikan sasaran jika ditinggal.

652. Ketika Indonesia mengumumkan pada 12 September bahwa Indonesia akan menerima intervensi internasional, ada kekhawatiran bahwa TNI dan milisi akan melakukan balas dendam terhadap staf UNAMET dan orang-orang yang bersama dengan mereka di markas UNAMET sebelum pasukan mendarat di Dili.⁸¹⁰ Aktivitas diplomatik yang intensif meminta izin Presiden Habibie dan Perdana Menteri Howard untuk melakukan evakuasi terhadap 1.500 orang Timor yang mengungsi di markas UNAMET, dan pada 14 September mereka dievakuasi ke Darwin. Ian Martin ikut terbang bersama mereka. Markas UNAMET ditutup, dan tim kecil yang terdiri atas 12 staf UNAMET dipindah ke konsulat Australia yang dijaga untuk menunggu kedatangan Interfet, dan dikepung oleh tentara Kostrad.

Evakuasi penduduk secara paksa

653. Di balik upaya diplomatik yang gencar dan foto-foto yang terbatas mengenai Timor-Leste yang dikirim oleh orang-orang yang masih berada di markas UNAMET, perusakan dan pemindahan paksa yang telah mulai pada hari-hari setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat semakin meningkat. Meskipun pada umumnya lebih buruk dan dengan waktu lebih lama di wilayah barat di mana TNI-milisi lebih kuat, kekerasan terjadi di seluruh wilayah.⁸¹¹

654. Sebelum Jajak Pendapat, TNI dan polisi telah merencanakan evakuasi massal penduduk. Mereka mempunyai rencana darurat terperinci untuk menyelamatkan penduduk dari perang saudara yang diperkirakan Indonesia akan terjadi setelah Jajak Pendapat. Ini merupakan bagian dari kebijakan yang direncanakan sebelumnya,

seperti disebutkan di atas (lihat butir 561).⁸¹² Ada perbedaan pendapat mengenai apakah ini merupakan evakuasi untuk melindungi orang Timor-Leste, atau pemindahan paksa di bawah intimidasi dan kekerasan. Sementara sebagian orang benar-benar ingin meninggalkan wilayah tersebut, kondisi kekerasan diciptakan oleh TNI dan milisi, pelaku yang sama yang melakukan evakuasi. Setelah Jajak Pendapat, 250.000 orang, atau lebih daripada seperempat penduduk, dipindahkan dari Timor-Leste, paling banyak ke Timor Barat (lihat Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan). Baik militer maupun polisi terlibat dalam upaya pemindahan ini, dan polisi serta Kodim digunakan sebagai tempat transit untuk evakuasi.⁸¹³ Karena takut terhadap milisi yang menyerang, banyak orang mencari perlindungan kepada militer atau polisi dan setelah itu mereka dibawa ke Timor Barat. Saksi mata mengatakan bahwa orang-orang diusir dari rumah mereka oleh TNI dan milisi, kemudian rumah mereka dirusak.⁸¹⁴ Pengusiran paksa terus terjadi hingga kedatangan Interfet pada 20 September.⁸¹⁵ Banyak orang Timor-Leste terbang dengan pesawat menuju Jawa beberapa hari setelah Jajak Pendapat, karena takut pecahnya kekerasan.

655. Sekitar 400.000 orang diperkirakan melarikan diri untuk menghindari kekerasan di kota dan desa menuju bukit di pedalaman Timor-Leste yang keadaannya relatif aman (lihat Bab 7.3.: Pemindahan paksa dan kelaparan). Karena mereka tidak memercayai militer atau Polisi Indonesia, banyak yang lari mencari perlindungan di markas Falintil di gunung-gunung. Puluhan ribu orang meninggalkan kota-kota besar. Sekitar 10.000 meninggalkan Ermera, dan antara 30.000 dan 40.000 orang meninggalkan Dili menuju wilayah di sekitar kompleks gereja di kaki bukit sekitar Dare. Di Dare, orang-orang yang memiliki telepon seluler mengadakan kontak ke seluruh dunia dan menjelaskan langsung apa yang mereka lihat dari atas bukit dengan mata-kepala mereka mengenai perusakan kota Dili. Makanan, air, dan obat-obatan tidak mencukupi, dan ada ketakutan besar akan adanya serangan TNI dan milisi.

Interfet datang: TNI ditarik

656. Pada 19 September, Komandan Interfet dari Australia Mayor Jenderal Peter Cosgrove, wakilnya dari Thailand, dan kepala dari kontingen negara lain terbang dari Darwin menuju Dili, yang ditemani oleh kepala UNAMET, Ian Martin. Pada 20 September, tentara Interfet tiba di Timor-Leste.*

657. Militer Indonesia dalam proses penarikan. Pada 20 - 21 September, Batalion 745 ditarik dari Lautém ke Dili, dan diketahui membunuh hingga 17 orang saat mengundurkan diri (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Selain pembunuhan oleh TNI pada periode pasca-Jajak Pendapat, kelompok-kelompok milisi tertentu masih terus aktif. Pada 23 September, milisi membunuh 12 orang di Ainaro. Pada 25 September, lima hari setelah Interfet tiba di Timor-Leste, milisi Tim Alfa, yang telah lama menjalin hubungan dengan

* Dengan kekuatan penuh, Interfet terdiri atas kurang-lebih 11.000 pasukan dari dua puluh negara yang berbeda. Australia bertindak sebagai pemimpin pasukan, dan memiliki 5.000 pasukan. Diperlukan waktu beberapa lama untuk mencapai kekuatan maksimum, dan pada awalnya, jumlah pasukan TNI masih melebihi jumlah pasukan Interfet [Dunn, *East Timor*, hal. 361].

Kopassus, menghadang dan mengeksekusi, dengan menggunakan parang, anggota iring-iringan kemanusiaan yang dipimpin oleh Biarawati Katolik, di tikungan di dekat Sungai Sika di Kabupaten Lautém. Sembilan orang, termasuk lima biarawati, seorang wartawan Indonesia, dan dua orang lainnya terbunuh.⁸¹⁶

658. Sadar akan kemarahan TNI atas intervensinya, serta adanya potensi bahaya dari kelompok milisi, Interfet menempatkan pasukan dengan hati-hati. Interfet butuh waktu satu bulan untuk mencapai daerah terisolasi seperti Oecussi. Setelah keamanan dapat dipulihkan, orang-orang yang tadinya bersembunyi di gunung-gunung atau mencari perlindungan pada Falintil kembali ke puing-puing kota dan desa mereka. Banyak di antara orang-orang yang kembali dari gunung dan tempat lainnya karena mengungsi berada dalam keadaan lapar dan sakit, dan umumnya dalam kondisi sangat jelek. Pada 30 Oktober, militer Indonesia yang terakhir telah ditarik.⁸¹⁷ Komandan Falintil Xanana Gusmão hadir di lapangan terbang Dili untuk menyaksikan pemberangkatan tentara terakhir yang ditarik.

659. Pengalaman 250.000 pengungsi di Timor Barat benar-benar berbeda dengan para pengungsi yang masih berada di wilayah Timor-Leste. Sebagian besar dari mereka tinggal di kamp sepanjang perbatasan dan di dekat Kupang. Komisi mendengarkan kesaksian langsung dari koalisi LSM Indonesia dari Timor Barat, yang bekerja dengan pengungsi Timor-Leste.⁸¹⁸ Koalisi menceritakan tentang kamp-kamp yang dikontrol oleh TNI dan kelompok milisi, di mana orang-orang sipil hidup di bawah ketakutan dan intimidasi. Perempuan dewasa dan anak-anak perempuan khususnya tidak berdaya dan rentan. Kesaksian pada Komisi dari perempuan yang menjadi korban bercerita tentang perbudakan seksual oleh para anggota milisi.

660. Fasilitas di Timor Barat tidak layak dan tidak dapat menampung jumlah pengungsi yang besar tersebut. Saat tiba, banyak pengungsi menandatangani formulir yang menyatakan keinginan mereka untuk menjadi WNI dan bersedia dimukimkan di wilayah mana pun di Indonesia. Beberapa orang kemudian mengatakan bahwa mereka menandatangani karena dipaksa.⁸¹⁹ Kelompok milisi berkuasa di kamp pengungsi, dan terus mencari tokoh-tokoh CNRT. Mau Hodo, yang telah mencoba berdialog dengan KPS setelah Jajak Pendapat, hilang di Atambua.⁸²⁰ Lama setelah referendum, milisi terus melakukan pelecehan dan mengintimidasi pengungsi, dan menyebarkan informasi bohong mengenai situasi di Timor-Leste. Mereka juga turut campur dengan orang-orang Timor yang ingin kembali.⁸²¹

Pembentukan UNTAET: Resolusi Dewan Keamanan 1272, 25 Oktober 1999

661. Sejumlah kecil staf UNAMET kembali ke Timor-Leste bersama Interfet. Petugas penghubung militer merupakan orang-orang yang pertama kembali, kemudian disusul oleh polisi dan petugas urusan sipil. Perhatian utama mereka adalah keamanan dan stabilitas, dan menangani krisis kemanusiaan yang dianggap mendesak. Dengan penempatan pasukan Interfet dan pengamanan wilayah Timor-Leste, intervensi kemanusiaan internasional dalam jumlah besar

mulai berdatangan. Konferensi donor diadakan pada November di Tokyo di mana janji sebesar \$ 522 juta diterima.⁸²² Badan-badan PBB, IMF, dan Bank Dunia, serta LSM internasional melakukan mobilisasi bantuan keadaan darurat. CNRT menyiapkan jaringannya untuk membantu operasi ini. LSM Timor aktif dalam bantuan kemanusiaan dan koordinasi, meskipun mereka menghadapi tantangan besar mengurus lembaga mereka sendiri sementara operasi internasional yang besar berlangsung. Gereja Katolik memainkan peranan penting dalam melakukan koordinasi di banyak tempat.

662. Indonesia bersikeras bahwa secara *de jure* ia mengontrol Timor-Leste sampai MPR membuat keputusan resmi mengenai hasil Jajak Pendapat. Namun, Indonesia setuju bahwa PBB dapat memegang kekuasaan secara *de facto*.⁸²³ Pada 19 Oktober, MPR mencabut Undang-Undang tahun 1976 tentang penggabungan Timor-Leste sebagai sebuah provinsi Timor-Timur, dan pada 25 Oktober Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1272 (1999) yang membentuk Pemerintahan Transisi PBB untuk Timor-Leste (UNTAET), yang menjadikan PBB sebagai pemegang otoritas pemerintahan resmi untuk Timor-Leste.

Pulang

663. Bagi orang Timor yang berada di Timor Barat, di daerah lain di Indonesia, di Portugal, Australia, dan belahan dunia yang lain; orang-orang yang terusir baru-baru ini; mereka yang dibebaskan dari berbagai penjara Indonesia; dan mereka yang lama berada dalam pengasingan, pertanyaannya ialah kapan dan bagaimana mereka dapat kembali ke Timor-Leste. Uskup Belo adalah tokoh yang pertama kembali pada 5 Oktober setelah sebulan berada di luar wilayah Timor-Leste. Xanana Gusmão kembali di tengah-tengah sambutan yang meriah pada 22 Oktober. Setelah 24 tahun berada di luar negeri, José Ramos-Horta tiba dengan Pemerintahan Transisi PBB yang baru diangkat dan Utusan Khusus Sekjen PBB, Sérgio Vieira de Mello, pada 1 Desember. Pengungsi Timor-Leste mulai kembali dari Timor Barat pada bulan-bulan akhir 1999, dibantu oleh UNHCR, IOM, dan LSM internasional. Yang lain, sebagian berada di pengasingan sejak 1975, kembali dan menemukan kampung halaman mereka menjadi abu.

664. Hak untuk menentukan nasib sendiri akhirnya dihormati dan ditegakkan oleh masyarakat internasional, namun hanya setelah orang-orang Timor-Leste menunjukkan keberanian besar untuk menghadapi intimidasi dan kekerasan massal dan setelah mereka memberikan suara mereka. Tugas membangun negara didasarkan atas penghormatan hak asasi manusia, penegakan hukum, serta prinsip demokrasi, termasuk pengadilan bagi kejahatan masa lalu terhadap kemanusiaan, adalah pekerjaan dan harapan generasi saat ini dan masa mendatang.

Catatan akhir

1. Asvi Warman Adam, dalam sebuah makalah berjudul "Sejarah Timor-Timur dalam Sejarah Indonesia" disampaikan dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2004.
2. Luís Filipe F. R. Thomaz, *De Ceuta A Timor*, DIFEL, Lisabon, 1994, hal. 598.
3. James Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, Longueville Media, Edisi ketiga 2003, Australia, hal.17
4. René Pélissier (ed), *Timor en Guerre, Le Crocodile et Les Portugais (1847-1913)*, Pelissier: Orgaral, 2000.
5. Soebandrio, yang kemudian menjabat Menteri Luar Negeri, pada Komite Pertama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1957, kutipan dalam Dunn hal. 85 - 86
6. Geoffrey Robinson, "People's War: Militias in East Timor and Indonesia", dalam *South East Asia Research* 9, 3, hal. 271 - 318.
7. Hélio Felgas, *Timor Português*, Agência Geral do Ultramar, 1956, hal. 227, seperti dikutip dalam Abílio Araújo, *Timor-Leste: Os Loricos Vontaram a Cantar*, Lisabon, 1977, hal. 75.
8. Lihat Geoffrey C. Gunn, *Timor Loro Sae: 500 Years*, Livros do Oriente, Makau, 1999, hal. 95 - 103.
9. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, hal.17
10. René Pélessier (eds), *Timor en Guerre, Lè Crocodile et Les Portugais (1847-1913)*, Pelissier: Orgaral, 2000.
11. Peter Hastings, "The Timor Problem", *Australian Outlook*, Vol. 29, No. 1.
12. David Scott Kesaksian yang disampaikan pada audiensi nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Dili, 15 - 17 Maret 2004.
13. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, hal. 19 - 22.
14. Lihat Tomás Gonçalves testimony to CAVR to National Public Hearing on the International Political Conflict of 1974-1976, 15-18 Desember 2003.
15. Gunn, *Timor Loro Sa'e* hal. 235 - 236.
16. Rowena Lennox, *Fighting Spirit of East Timor: The life of Martinho da Costa Lopes*, Pluto Press, 2000, hal. 62.
17. Xanana Gusmão, *Timor-Leste: Um Povo Uma Pátria*, Edições Colibri, 1994, hal. 3.
18. Arnold Kohen, *From the Place of the Dead: Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, Lion Books, 1999, hal. 88.
19. Lennox, *Fighting Spirit*, hal. 63.
20. Gusmão, *Um Povo Uma Pátria*, hal. 3.
21. Lihat Bill Nicol, *Timor: The Stillborn Nation*, Visa Books, Melbourne dan Connecticut, 1978, hal. 21
22. João César das Neves, *The Portuguese Economy: A Picture in Figures XIX and XX Centuries*, Universidade Católica Editora, 1994, hal. 79-84.
23. ACFOA (Australian Council for Overseas Aid), *Report on Visit to East Timor*, Oktober 1975, hal. 7.
24. Dokumen resmi Sidang Umum PBB, Sesi ke-30, Suplemen No. 23 (A/10023/Rv.1), bab VIII, lampiran, bagian B, paragraf 56.
25. Thomaz, hal. 686 - 687; Helen Hill, *Stirrings of Nationalism in East Timor: Fretilin 1974 - 1978, The Origins, Ideologies and Strategies of a Nationalist Movement*, Otford Press, 2002, hal. 39.
26. João Mariano de Sousa Saldanha, *Ekonomi Politik Pembangunan Timor-Timur*, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal. 57; lihat juga: Lembar Kerja tentang Timor dipersiapkan oleh Sekretariat PBB untuk Komite Khusus tentang Dekolonisasi, 20 November 1975, dalam Heike Krieger (ed.), *East Timor and the International Community: Basic Document*, Cambridge University Press, 1997, hal. 18-26.
27. *Timor: pequena monografia*, Agência-Geral do Ultramar, 1965, hal. 47-48.
28. Resolusi Sidang Umum PBB 1807 (XVII), 1962, para. 4 (c). Lihat Heike Krieger (ed.), *East Timor and the International Community: Basic Documents*, Cambridge University Press, 1997, hal. 31.

29. Bill Nicol, *Timor: The Stillborn Nation*, Visa Books, Melbourne dan Connecticut, 1978, hal.21
30. *Relatório da Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor (Relatório CAEPDT)*, Presidência do Conselho de Ministros, Lisabon, 1981, hal. 25.
31. Norrie MacQueen, *The Decolonization of Portuguese Africa: Metropolitan Revolution and the Dissolution of Empire*, Longman, London, 1997 hal. 79.
32. *Relatório da Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor (Relatório CAEPDT)*, Presidência do Conselho de Ministros, Lisabon, 1981, hal. 5.
33. Undang-undang No. 7/1974. Lihat Heike Krieger (ed.), *East Timor and the International Community: Basic Documents*, Cambridge University Press, 1997, hal. 34.
34. Lihat Mario Lemos Pires, 2003, testimoni video kepada Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974 - 1976, 15 - 18 Desember 2003
35. Mário Carrascalão, Xanana Gusmão, Francisco Xavier do Amaral, Domingos de Oliveira, João Carrascalão menjelaskan masalah ini dalam kesaksian masing-masing pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal pada 1974 - 1976, Dili, 15 - 18 Desember 2003.
36. Kreiger, hal. 25-29.
37. Ibid, hal. 30-31.
38. Mário Lemos Pires, *Descolonização de Timor*, Publicações Dom Quixote, 1994, . 46-47.
39. *Relatório CAEPDT*, hal. 44.
40. Domingos Oliveira, mantan Sekretaris Jenderal partai politik UDT berbicara pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal pada 1974 - 1976, Dili, 18 Desember 2003
41. Lihat Mario Lemos Pires, *Relatório do Governo de Timor*, hal. 28 - 30. Lihat juga kesaksian dari Mário Carrascalão dan Domingos de Oliveira tentang UDT, dan Mâri Alkatiri, José Ramos-Horta, dan Francisco Xavier do Amaral tentang ASDT dan Fretilin pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal pada 1974 - 1976, 15 - 18 Desember 2003
42. Domingos de Oliveira, kesaksian pada Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 18 Desember 2003.
43. Mário Lemos Pires, *Descolonização de Timor*, Publicações Dom Quixote, 1994, hal. 191-121.
44. Lihat Lemos Pires, *Relatório*, hal. 23; lihat juga Jill Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism*, The University of Queensland Press, 1978, hal. 67.
45. Wawancara CAVR dengan Paulo Freitas da Silva, Dili 9 Juli 2003; lihat juga Pires, *Relatório*, hal. 20.
46. James Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, Longueville, 2003, hal. 62.
47. Lihat José Ramos-Horta, Jusuf Wanandi, dan James Dunn, kesaksian lisan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003. Testimoni Jusuf Wanandi disampaikan sebagai sebuah makalah dan dibacakan secara terbuka oleh Komisiner Nasional Pdt. Agustinho Vasconcelos
48. Gary Gray, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Komunitas Internasional, 15 - 17 Maret 2004.
49. Lihat é Ramos-Horta, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974 - 1976, 17 Desember 2003.
50. Francisc Vendrell, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15 - Maret 2004.
51. Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, dan London, hal. 155; Adam Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*, Allen & Unwin, NSW, 1994, hal. 20
52. James Dunn, kesaksian lisan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974 - 1976, 17 Desember 2003; Lihat juga Xanana Gusmão, kesaksian lisan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
53. J.R. Walsh dan G.J. Munster, *Documents on Australian Defence and Foreign Policy 1968-1975*, Hong Kong, 1980, . 192-193.
54. Catatan Resmi Majelis Umum, dikutip di Decolonisation, *UN Department of Political Affairs*, No.7, Agustus 1976, hal.41

55. Dikutip dalam Jill Jolliffe, *East Timor: National and Colonialism*, The University of Queensland Press, 1978, hal. 66. Faksimil dari surat tersebut ada di Arsip CAVR.
56. Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT], Wendy Way (ed.), *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974 - 1976*, University of Melbourne Press, 2000, hal. 18.
57. Lihat UN document A/AC 108/L. 13.3, tertanggal 3 Desember 1962, dikutip dalam John Taylor, *East Timor: The Price of Freedom*, hal. 21. Lihat juga Ken Conboy, *Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service*, Equinox Publishing, Singapore, 2004, hal. 39.
58. Mâri Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15 - 18 Desember 2003.
59. Wawancara dengan Aloysius Sugianto, mantan perwira Opsus, Jakarta, 24 Juli 2003.
60. Pernyataan Duta Besar Sani kepada Majelis Umum, 13 Desember 1975, dicetak ulang dalam Machmuddin Noor, *Lahirnya Propinsi Timor-Timur*, Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia, 1977, hal. 271.
61. James Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, hal. 90. Lihat juga kesaksian James Dunn ke Audiensi Publik Nasional CAVR Mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15 - 18 Desember 2003.
62. Soekanto dkk., *Integrasi: Kebulatan Tekad Rakyat Timor-Timur*, Yayasan Parikesit, November 1977, hal. 97.
63. Lihat Dokumen 7 Kabel ke Canberra, Jakarta 22 Mei 1974 di DFAT Wendy Way (Ed), *Australia and the Indonesian Incorporation of East Timor*, hal. 56.
64. Lihat Dokumen 26 Catatan Pertemuan antara Whitlam dan Soeharto, Wisma Negara, Yogyakarta, 6 September 1974, pukul 10.00 di DFAT, *Australia and the Indonesian Incorporation of East Timor*, hal. 97.
65. Bilveer Singh, *Timor-Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan*, Institute for Policy Studies, 1998, hal. 52.
66. Wawancara dengan Jusuf Wanandi, CSIS, Jakarta, 24 Juli 2003.
67. Lihat Mario Carrascalão, Kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR Mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
68. José Ramos-Horta, *Timor-Leste: Amanhã em Dili*, Publicações Dom Quixote, 1994, hal. 58-59. Lihat juga *Funu: The unfinished saga of East Timor*, The Red Sea Press, 1987, hal. 6-7.
69. Ramos-Horta, op. cit., hal. 75-76. Dia juga mengatakan bagaimana dia diklaim "memprovokasi" para pemuda di Bidau untuk melemparkan batu kepada prajurit Portugis, klaim yang menurutnya jelas-jelas salah.
70. Domingos Oliveira, Kesaksian Lisan Audiensi Publik Nasional CAVR Mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
71. Domingos Oliveira, Kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR Mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
72. Francisco Xavier Do Amaral, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional mengenai Konflik Internal, 15 -18 Desember 2003
73. Lemos Pires, Kesaksian Video Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
74. Mário Carrascalão, kesaksian pada Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
75. João Carrascalão, Mâri Alkatiri, Francisco Xavier Amaral dan Domingos de Oliveira, Kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
76. José Ramos-Horta, *Timor-Leste: Amanhã em Dili*, Publicações Dom Quixote, 1994, hal. 96-97.
77. Lihat Domingos Oliveira, Kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15 - 18 Desember 2003.
78. Xanana Gusmão, Kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal -76, 15-18 Desember 2003.
79. Wawancara CAVR dengan Tomás Gonçalves, Dili, 23 Oktober 2003.

80. Rogério Lobato, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
81. Rogerio Lobato, *ibid*
82. Pires, *Decolonização*, hal. 112 - 113.
83. Rogerio Lobato, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15 - 18 Desember 2003.
84. Mâri Alkatiri, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003; Lihat juga wawancara dengan Nicolau Marito Reis, Dili
85. Mario Carrascalão dan Domingos Oliveira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
86. Mâri Alkatiri, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
87. Mâri Alkatiri, *ibid*
88. Manuel Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15 Desember 2003.
89. Domingos Oliveira, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
90. Fretilin, *Manual e Programa Políticos*, hal. 9
91. Lihat Mari Alkatiri, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
92. Lihat Mario Carrascalão, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
93. Lihat Mario Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
94. José Ramos-Horta, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
95. João Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
96. José Ramos-Horta, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
97. Mario Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
98. Mario Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
99. Mario Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
100. João Carrascalão dan Mâri Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
101. Mâri Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
102. José Ramos-Horta, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
103. Tomãs Gonçalves, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
104. Lihat, misalnya, Manuel Duarte, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003; lihat juga Alexandre da Costa dan Antônio Amado, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003; lihat juga Domingos Maria Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional mengenai Penahanan Politik, 17-18 Februari 2003.
105. Isabel dos Santos Neves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional mengenai Anak-anak dan Konflik, 29-30 Maret 2004.

106. Xanana Gusmão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
107. Mário Lemos Pires, *Decolonização de Timor*, Publicações Dom Quixote, 1994, h. 58.
108. *Relatório da Comissão de Análise e Esclarecimento do Process de Descolonização de Timor II*, [Analisa dan Penjelasan mengenai proses dekolonisasi di Timor II], presidência do conselho de ministros, Lisabon, 1981
109. Mario Lemos Pires, kesaksian video Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 16 Desember 2003.
110. *Relatório da Comissão de Análise e Esclarecimento do Process de Descolonização de Timor II*, h. 38.
111. A. Barbedo de Magalhães, *Descolonização do Ensino em Timor: Um Projecto a Intervenção Indonésia Matou á Nascimento*, Porto, Februari 1997.
112. Rogério Lobato, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
113. Mario Lemos Pires, kesaksian video Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 17 Desember 2003.
114. Mario Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
115. Domingos Oliveira, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
116. Mario Carrascalão dan Mari Alkatiri, kesaksian lisan Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
117. Domingos Oliveira, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
118. Mario Lemos Pires, kesaksian video Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
119. Lihat, "Setelah Townsville," *Tempo*, 5 Mei 1975; Conboy, *Kopassus*, h. 208; lihat juga Ramos-Horta, *Funu*, hal. 66.
120. Ramos-Horta, *Funu*, h. 64.
121. Mario Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
122. Domingos Oliveira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
123. Lihat kesaksian dari Xanana Gusmão dan Mario Carrascalão Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
124. Domingos de Oliveira, mantan Sekretaris Jenderal UDT, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
125. Lihat: "Indonesia Plans Armed Takeover in Timor," *The Age*, 22 Februari 1975, Melbourne, Australia, dikutip dalam Taylor, *East Timor*, h. 40 dan catatan kaki 44; lihat juga Conboy, *Kopassus*, h. 238.
126. Jiwa Atmaja, *TNI Kembali ke Jatidiri: Profesionalisme Kodam IX/Udayana*, h. 74.
127. Conboy, *Intel*, h. 90.
128. Wawancara CAVR dengan Tomãs Gonçalves, anggota Apodeti awal, Dili, 23 Oktober 2003.
129. Tomãs Gonçalves, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
130. Tomãs Gonçalves, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
131. Conboy, *Kopassus*, hal. 207.
132. Soekanto (ed.), *Integrasi*, Yayasan Parikesit, 1976, hal. 116-134.
133. Lemos, *Decolonização*, hal. 49.
134. *Relatorio II*, hal. 54.
135. *Relatorio II*, hal. 44-46.

136. Mário Lemos Pires, kesaksian video pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
137. Lihat Dokumen 123 di , *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor 1974-1976* , 247.
138. Lihat Dokumen 26, Record of Meeting between Whitlam and Soeharto, State Guest House, Yogyakarta, 6 September 1974, 10 am, dalam DFAT, Wendy Way (Ed) *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor*, hal. 96.
139. Ibid. hal. 97.
140. Lihat Dokumen 123, Record of Conversation between Whitlam and Soeharto, Townsville, 4 April 1975,dalam Wendy Way (Ed), *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, hal. 245
141. Ibid
142. Lihat Dokumen 14, Memorandum to Jakarta, Canberra 5 July 1974, dalam DFAT, Wendy Way (Ed) *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, hal. 119.
143. Lihat Dokumen 37, Minute from Woolcott to Renouf, Canberra, 24 September 1974, dalam DFAT, Wendy Way (Ed) *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, hal.111.
144. Lihat Document 127, Letter from Woolcott to Willesee, Jakarta, 17 April 1975, dalam DFAT, Wendy Way (Ed) *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, hal.253.
145. Richard Woolcott, *The Hot Seat, Reflection on Diplomacy from Stalin's Death to the Bali Bombings*, Harpers Collins Publishers, Sydney, 2003, hal. 306.
146. Lemos , *Decolonização*,Publicações Dom Quixote, 1994, hal. 167-168.
147. Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
148. Francisco Xavier do Amaral, ibid.
149. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Perdana Menteri RDTL, di kantor Perdana Menteri, Juni 2004. Lihat juga kesaksian oleh Mari Alkatiri pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
150. Mário Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
151. National Security Archive collection, Memorandum of Conversation between Presidents Ford and Suharto, 5 July 1975, Camp David.
152. Woolcott, *The Hot Seat*, hal.148.
153. Lihat Domingos de Oliveira dan João Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
154. Mário Lemos Pires, kesaksian video pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 16 Desember 2003.
155. Tomãs Gonçalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
156. Wawancara CAVR dengan João Carrascalão, Dili, 30 Juli 2004.
157. Lihat dokumen 169, Cablegram to Canberra, Jakarta, 17 Agustus 1975, dalam DFAT, Wendy Way (ed), *Documents on Australian Foreign Policy: Australia and the Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, hal.313
158. João Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
159. Mário Carrascalão dan Domingos de Oliveira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003 secara berurutan.
160. Submisi Domingos de Oliveira pada CAVR, hal. 26
161. Lemos Pires, *Decolonização*, Publicações Dom Quixote, 1994, hal. 181-231
162. Ibid, hal. 204.
163. Rogério , kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 17 Desember 2003.

164. Mário Carrascalão dan Domingos de Oliveira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
165. Mário Lemos Pires, kesaksian video pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 16 Desember 2003.
166. Lihat *Relatório da CAEPDT*, Presidencia do Conselho de Ministros, Lisbon, 1981, hal. 186-191; lihat juga Lemos Pires, *Decolonização*, hal. 228.
167. Lemos Pires, *Decolonização*, hal. 213.
168. Ibid, hal. 225.
169. Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism*, The University of Queensland Press, 1978, hal. 121-122; lihat juga Pires, *Decolonização*, hal. 205
170. *Relatório do Governo de Timor*, hal. 118.
171. Wawancara CAVR dengan Rogério Lobato, Dili, 26 Agustus 2003.
172. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, anggota komite regional ASDT, Dili, 21 Juni 2004.
173. Wawancara CAVR dengan Rogério Lobato, Dili, 26 Agustus 2003.
174. Mario Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15 Desember 2003; Mário Lemos Pires, kesaksian video pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15 Desember 2003; dan Profil Komunitas , Suco Asucai Lorosae, Sub-distrik Nain Feto, Dili, 29 Agustus 2003.
175. Mario Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
176. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
177. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, hal. 176
178. Wawancara CAVR dengan Elidio Maria de Jesus, 24 Juni 2003; lihat juga Pernyataan HRVD # 03426-01 dan 03427-01.
179. Lihat Adelino Soares, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Pemenjaraan Politis, 17-18 Desember 2003; lihat juga Manuel Duarte, kesaksian lisan pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003; lihat juga wawancara dengan Florentino de Jesus Martins, Ermera, [wawancara tanpa tanggal].
180. Xanana Gusmão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
181. Rogério Lobato, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
182. João Carrascalão dan Mári Alkatiri, kesaksian lisan pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal Bersenjata 1974-76, 15-18 Desember 2003
183. Tentang keterlibatan tokoh-tokoh senior dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Fretilin, lihat wawancara CAVR dengan Humberto Martins da Cruz, Dili, dan wawancara CAVR dengan Francisco Gonçalves; tentang pelanggaran-pelanggaran UDT, lihat wawancara CAVR dengan João Carrascalão, Dili, 30 Juli 2004.
184. Mário Carrascalão dan Rogério Lobato, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15 dan 17 Desember 2003 secara berurutan.
185. Mário Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15 Desember 2003.
186. Tomás Gonçalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003; lihat juga wawancara dengan Aloysius Sugiyanto, Jakarta, 23 Juli 2003.
187. Tomás Gonçalves, kesaksian oral pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003, João Carrascalão, *ibid*; dan Bapa Francisco Fernandes dan Bapa Apolinario Guterres, Pernyataan Dikirim ke Komite Empat Sidang Umum PBB atas nama Comissão dos Refugiados de Timor Oriental, 26 Oktober 1979.
188. Lemos Pires, *Decolonização*, hal. 247-248.

189. Jolliffe, *East Timor*, hal. 139; lihat juga Dunn, *East Timor*, 2003 hal. 179.
190. *Relatório da CAEPDT*, hal. 230.
191. Lihat *Relatorio da CAEPDT I*, hal. 308-311; *Relatorio da CAEPDT*, hal. 231; Dunn, op.cit., hal. 184; dan Jolliffe, op.cit., hal.184.
192. Lihat Akihisa Matsuno, "The Balibó Declaration: Between Text and Fact," dalam Pedro Pinto Leite [editor], *The East Timor Problem and the Role of Europe*, International Platform of Jurists for East Timor, 1996.
193. Heike Krieger [editor], *East Timor and the International Community: Basic Documents*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, hal. 70-71.
194. Mario Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003; lihat juga Jolliffe, hal. 150.
195. Conboy, *Kopassus*, hal. 211 dan 233; lihat juga Julius Pour, *Benny Moerdani: Portrait of a Soldier Statesman*, Yayasan Perjuangan Panglima Besar Sudirman, Jakarta, 1993, hal. 390.
196. Conboy, *Kopassus*, hal. 218-221; lihat juga wawancara dengan Rui Lopes, Camenassa, Covalima, 31 Oktober 2003.
197. Conboy, *Kopassus*, hal. 212.
198. Wawancara CAVR dengan Rui Lopes, Camenassa, Covalima, 31 Oktober 2003.
199. "International Committee of the Red Cross, East Timor Relief Operation," *Report to the ICRC Geneva, 16 September 1976*, hal. 1.
200. Jolliffe, *East Timor*, hal. 146.
201. Jolliffe, *East Timor*, hal. 164; lihat juga Helen Hill, *Stirrings of Nationalism in East Timor*, Otford Press, Sydney, 2001, h. 154.
202. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004.
203. Jolliffe, *East Timor*, hal. 155; Hill, *Stirrings of Nationalism* ; Dunn, *East Timor*, 2003, hal. 271.
204. Komite Sentral Fretilin, siaran pers, 13 September 1975, ditandatangani oleh Francisco Xavier do Amaral. arsip CAVR.
205. *Relatório da CAEPDT*, hal. 230.
206. Pernyataan Komite Sentral Fretilin, 16 September 1975, dokumen *ditulis* tapi tidak ditandatangani oleh Francisco Xavier do Amaral. [Arsip CAVR].
207. Dunn, *Timor: A People Betrayed*, hal. 229.
208. Jolliffe, *East Timor*, hal. 180.
209. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004.
210. Lihat, contohnya, Pernyataan HRVD 02226; 09081; 08432.
211. Lihat contohnya João Baptista, 19/08/2003, Alleu, Pernyataan 05806-01, basis data PRK CAVR; dan João Soares, 15/05/2003, Ainaro, Pernyataan 04969-01, CAVR basis data PRK.
212. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
213. Pernyataan HRVD 01688.
214. Lihat Mâri Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, sebagai Sekretaris Jenderal Fretilin, 15-18 Desember 2003.
215. *Report on Visit to Portuguese Timor by Senator Gietzelt dan K.L. Fry*, h. 4 [Arsip CAVR]; lihat juga Dunn, *East Timor: Rough Passage to Independence*, 2003, hal. 220.
216. Mâri Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974-76, sebagai Sekretaris-Jenderal Fretilin, 15-18 Desember 2003.
217. Lihat Senator Gietzelt dan KL Fry, *Report on visit to Portuguese Timor*, September 1975; lihat juga James Dunn, *A People Betrayed*, hal. 187; lihat juga wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004.
218. Monis da Maia, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-8 Desember 2003.

219. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, mantan Sekretaris Jenderal Fretilin, Dili, 25 Juni 2004.
220. Wawancara CAVR dengan Monis da Maia, Manlewana-Dili, 5 Desember 2004.
221. Wawancara CAVR dengan João da Costa, Letefoho-Same, 24 Juni 2003.
222. José Ramos-Horta, "Timor-Leste Amanah Ed Dili", dari De regresso de Jacarta, a cupula da UDT hal. 107-113.
223. Wawancara CAVR dengan João da Costa, Letefoho-Same, 24 Juni 2003.
224. *Report on Visit to Portuguese East Timor*, Senator Gietzelt dan K.L. Fry, h. 4.
225. Rogerio Lobato, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
226. Mâri Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
227. Wawancara CAVR dengan Filomeno Pedro Cabral Fernandes, Dili, 5 Mei 2004.
228. Pernyataan HRVD 03361-01.
229. Xanana Gusmão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003; lihat juga Rogério Lobato, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
230. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
231. Lihat Dunn, *A Rough Passage to Independence*, 2003 p 211; Lihat juga *Report on Visit to Portuguese East Timor*, Senator Goetzelt dan K.L. Fry, h. 3, Arsip CAVR.
232. *Report on Visit to Portuguese East Timor*, Senator Gietzelt dan K.L. Fry, hal. 8.
233. Helen Hill, *Stirrings of Nationalism in East Timor*, Otford Press, Sydney, 2001, hal. 155.
234. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
235. Hill, *Stirrings of Nationalism*, 2001, hal. 155.
236. Hill, *ibid.* 185.
237. *ICRC Relief Programme in Eastern Timor*, 24 November 1975, hal. 2; lihat juga Geoffrey Gunn, *Timor Loro Sae: 500 Years*, Livros do Oriente, 2000, bab 13 "Colonial Capitalism dan Underdevelopment in Post-war Timor."
238. Lihat John G. Taylor, *Perang Tersembunyi: Sejarah Timor-Leste yang Dilupakan*, Fortilos, Jakarta, 1998, hal. 1-28. [Diterjemahkan dari John G. Taylor, *Indonesia's Forgotten War: The Hidden History of East Timor*, Zed Books, London, 1991.]
239. Andre Pasquier kepada ICRC Geneva, *Concerning the Situation in East Timor, Report on the activities of the delegation from 1-15 September*, Darwin, 16 September 1975.
240. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Lecidere, 28 Agustus 2003.
241. Wawancara CAVR dengan Monis da Maia, Mantewana-Dili 5 Desember 2003; lihat juga wawancara dengan Rafael Nascimento, Aileu, Juni 2003.
242. Wawancara CAVR dengan Francisco do Amaral, mantan presiden Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
243. *Report on Visit to Portuguese East Timor*, Senator Gietzelt dan K.L. Fry, hal. 6.
244. ACFOA, *Report on a Visit to East Timor for the ACFOA Timor Task Force*, hal. 8.
245. Hill, *Stirrings of Nationalism*, 2000, hal. 192.
246. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, anggota komite regional ASDT, Dili, 21 Juni 2004.
247. *Report on Visit to East Timor for the ACFOA Timor Task Force*, hal. 4 dan hal. 7.
248. Shirley Shackleton, "Planting a Tree in Balibó", dalam Peter Carey, Ed, *East Timor at the Crossroads*, Cassell, New York, 1995, hal. 116.
249. Jolliffe, *East Timor*, hal. 201.
250. Adelino Gomes (Wartawan Portugis), rekaman film ada pada Arsip CAVR.
251. Wawancara dengan João Viegas Carrascalão, 13 Maret 1996, transkripsi, hal. 131, "Report on the Deaths of the Australian-Based Journalists in East Timor in 1975", Juni 1996.

252. Van Atta dan Toohey, "The Timor Papers, part II" *The National Times*, hal. 16.
253. Wawancara CAVR dengan Albino do Carmo, Suai, 31 Oktober 2003.
254. Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, h. 21; Conboy, *Kopassus*, hal. 231-232; *Korps Marinir TNI AL, 1970-2000*, Jakarta, Dinas Penerangan Korps Marinir, 2000, hal. 188-189.
255. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan pemimpin Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
256. Jolliffe, *East Timor*, h. 201; lihat juga Mâri Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
257. Francisco Xavier do Amaral, Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
258. Jolliffe, AAP's Delivery, 11 Oktober 1975, dikutip oleh Hill, *Stirrings of Nationalism*, 2001, hal. 157.
259. Hill, *Stirrings of Nationalism*, hal. 197.
260. Jolliffe, *East Timor*, hal. 215-16.
261. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, hal. 232.
262. Wawancara CAVR dengan Adriano João, bekas anggota Falintil selama 1975, Dili, September 2004.
263. Jolliffe, *East Timor*, hal. 217; wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, mantan Sekretaris Jenderal Fretilin, Dili, 25 Juni 2004.
264. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, mantan Sekretaris Jenderal Fretilin, Dili, 25 Juni 2004; lihat juga Jolliffe, *East Timor*, hal. 217; lihat juga José Ramos-Horta, *Funu: Perjuangan Timor Lorosae Belum Selesai*, Solidamor, Jakarta, 1998, hal. 145-146 [terjemahan dari Jose Ramos-Horta, *Funu: Unfinished Saga of East Timor*, The Red Sea Press, Trenton NJ, 1987].
265. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004; lihat juga Jolliffe, *East Timor*, hal. 216; lihat juga Ramos-Horta, *Funu*, hal. 146.
266. Hill, *Stirrings of Nationalism*, 2001, hal. 201.
267. Wawancara CAVR dengan Manuel Gaspar da Silva, mantan anggota milisi Fretilin, Uatolari, Viqueque 19 September 2003.
268. Hill, *Stirrings of Nationalism*, 2001, hal. 200.
269. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
270. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004.
271. Jolliffe, *East Timor*, hal. 217.
272. Jolliffe, *East Timor*, hal. 217; Ramos Horta, *Funu*, hal. 146.
273. Francisco Xavier do Amaral, "Comrades! Independence or death! We will win," terjemahan bahasa Inggris dari pidato yang disampaikan ketika pelantikan anggota menteri kabinet RDTL, Dili, 29 November 1975, hal. 8 [salinan ada pada arsip CAVR].
274. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004; lihat juga wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Anggota Majelis Daerah ASDT, Dili, 21 Juni 2004; lihat juga wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004.
275. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004.
276. Soekanto (ed.), *Integrasi*, hal. 283-284.
277. Lihat Akihisa Matsuno, "The Balibó Declaration: Between Text and Fact," dalam Pedro Pinto Leite [editor], *The East Timor Problem and the Role of Europe*, International Platform of Jurists for East Timor, 1996.
278. Mario Carrascalão, João Carrascalão, dan Domingos de Oliveira; Clementino Amaral; dan Paul Freitas; kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003; lihat juga José Martins dari KOTA dalam suatu wawancara dengan Aboeprijadi Santoso yang diterbitkan dalam *Jejak-jejak Darah: Tragedi & Pengkhianatan di Timor-Timur*, Amsterdam dan Yogyakarta: Stichting Inham & Pijar, 1996, hal. 85-86.
279. Mario Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.

280. *East Timor and the International Community: Basic Documents*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, hal. 39-40.
281. United Nations Department of Political Affairs, *Trusteeship and Decolonisation, No. 7*, Agustus 1976, hal. 44.
282. Wawancara CAVR dengan Jusuf Wanandi, bekas peneliti CSIS, , 24 Juli 2003.
283. Soekanto, *Integrasi*, hal. 276.
284. Soekanto, *Integrasi*, hal. 289-291.
285. "Malik Warns," *The Canberra Times*, 3 Desember 1975, dikutip dalam Jolliffe, *East Timor*, hal. 225-226.
286. Lihat, misalnya, dalam DFAT, Wendy Way (Ed), *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese East Timor*, hal. 468-470 Dokumen 206, Cablegram to Canberra, Kuala Lumpur, 2 September 1975
287. Lihat Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, hal.152, 155, 157; lihat juga telegram Kedutaan Besar AS di Surabaya ke Kedutaan Besar AS di Jakarta, 20 Februari 1975; memorandum 6362-x kepada Henry Kissinger dari National Security Council, 30 Desember 1974; Telegram US Department of State, Kedutaan Besar AS Jakarta kepada Menteri Luar Negeri, Washington, 21 Agustus 1975.
288. *Decolonization*, hal.30; lihat juga Jolliffe, *East Timor*, hal. 217.
289. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 1983, hal. 276.
290. Dunn, *ibid*, 1983, hal. 236.
291. Telegram dari Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri di Washington, Pertemuan, 6 Desember 1975.
292. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004; diulang kembali dalam Mari Alkatiri dan Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
293. Jolliffe, *East Timor*, hal. 226.
294. Jolliffe, *ibid*, hal. 227.
295. David Scott, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, Maret 2004.
296. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004.
297. Jolliffe, *East Timor*, hal. 232.
298. Kenneth Chan, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
299. Telegram dari Francisco Xavier do Amaral kepada Presiden AS Ford, Dili, 5 Desember 1975.
300. Telegram dari Kedutaan Besar Amerika Jakarta kepada Menteri Luar Negeri di Washington, 'Pertemuan Ford-Suharto', 6 Desember 1975.
301. Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya Propinsi Timor-Timur*, Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 83.
302. Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya*, hal. 82.
303. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, hal. 251.
304. Telegram dari Mari Alkatiri kepada Presiden UNSC, diserahkan kepada UNSC 8 Oktober, dikutip dalam telegram, Misi AS di PBB New York kepada Menteri Luar Negeri di Washington, *Cables to Security Council about Portuguese Timor from Fretilin*, 11 Oktober 1975.
305. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003,, hal. 196.
306. Lihat Van Atta and Toohy, hal. 15; juga lihat Ken Conboy, *Kopassus*, Equinox Publishing, Jakarta, 2003, hal. 231.
307. Hendro Subroto, *Eyewitness to the Integration of East Timor*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 147.
308. Asvi Warman Adam, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2004.

309. Lihat Subroto, *Eyewitness*, hal. 137-138 dan *Korps Marinir*, hal. 190.
310. Subroto, *Eyewitness*, hal. 142.
311. *Korps Marinir* hal. 190; juga lihat Subroto, *Eyewitness*, hal. 137.
312. Subroto, *Eyewitness*, hal. 137, 150; lihat juga M. Saleh Kamah, *Seroja*, hal. 106; juga lihat *Korps Marinir*, hal. 191.
313. Pour, *Murdani*, hal. 398; juga lihat James Dunn, *Timor: A People Betrayed*, 1996, hal. 282.
314. Subroto, *Eyewitness*, hal. 154.
315. Conboy, *Kopassus*, hal. 243.
316. John G. Taylor, *East Timor: Indonesia's Forgotten War*, Zed Books, London, 1991, hal. 70.
317. Subroto, *Eyewitness*, hal. 170.
318. Subroto, *ibid*, hal. 174.
319. Wawancara CAVR dengan Carlos Maria Soares, Dili, 27 Desember 2003.
320. George Aditjondro, *In the Shadow of Mt Ramelau: The Impact of the Occupation of East Timor*, Leiden, INDOC Belanda, 1994, hal. 87.
321. Pour, *Murdani*, hal. 325.
322. Memorandum Dewan Keamanan Nasional untuk Brent Scowcroft, dari Clinton E Granger, *Indonesian Use of MAP Equipment in East Timor*, 12 Desember 1975.
323. José Ramos-Horta, "Timor-Leste Amanha Em Dili", dari *De regresso de Jacarta, a cupula da UDT*, hal. 113.
324. *Pernyataan Pemerintah tentang Timor Portugis*, Antara, 9 Desember 1975.
325. *Pernyataan Pemerintah Indonesia tentang Timor Portugis*, Antara, 15 Desember 1975.
326. Lihat, sebagai contoh, M. S. Kamah, *Catatan dari Dili*, Antara, 19 Desember 1975.
327. Asvi Warman Adam, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2004.
328. Wawancara CAVR dengan Francisco Calsonha, 13 Agustus 2004, Dili; Wawancara CAVR dengan Kuo Nhen (Konneng) Lay (alias Mali Sera), 23 Februari 2004, Dili. Lihat juga Bab 7:2: Pembunuhan Di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa.
329. Wawancara CAVR dengan Alexandrino do Rego, mantan pekerja rumah sakit, Dili, 4 Februari 2004.
330. Wawancara CAVR dengan Frederico dos Santos Almeida, Dili, 29 Agustus 2003.
331. Wawancara CAVR dengan Kuon Nhen (Konneng) Lay, alias Mali Sera, Dili, 23 Februari 2004.
332. Subroto, *Eyewitness*, hal. 182.
333. Felismina dos Santos Conceição, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR Nasional mengenai Pembantaian, Dili, November 2003.
334. Lihat Wawancara CAVR dengan Francisco Soriano, Dili, 3 Juli 2004; juga lihat pernyataan HRVD 25666; juga lihat Wawancara CAVR dengan Francisco da Cunha, Dili, 3 Februari 2004.
335. Pernyataan HRVD 9471-02; juga lihat Wawancara CAVR dengan Domingos Freitas, Dili, 29 Juni 2004.
336. Lihat, misalnya, kesaksian Xanana Gusmão dan Francisco Xavier do Amaral pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
337. Kesaksian Xanana Gusmão di Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal Politik 1974-76, 15-18 Desember 2003.
338. Tomas Goncalves dan Clementino Amaral (sebagai wakil Partai KOTA) kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
339. Telegram, Misi di PBB, New York kepada Menteri Luar Negeri di Washington, *Portuguese Timor: Further Messages to United Nations from Fretilin*, 18 Desember 1975.
340. Pour, *Murdani*, hal. 398-399.
341. David Scott, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2004.

342. Telegram, Misi AS di PBB New York kepada Menteri Luar Negeri di Washington, *Portuguese Timor—Letter to President of UNSC from Fretilin*, 4 Februari 1976; juga lihat Telegram, selebaran US Department of State, *Timor*, 29 Januari 1976; juga lihat David Scott, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2004.
343. Telegram, Misi AS di PBB New York kepada Menteri Luar Negeri di Washington, *Text of letter to President of UNSC from Fretilin*, 4 Februari 1976.
344. Lihat Francesc Vendrell, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2004.
345. Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya Propinsi Timor-Timur*, Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia, 1977, hal. 26.
346. Noor, ibid, hal. 29.
347. Noor, ibid, hal. 52.
348. Telegram dari Pemerintahan Sementara Timor-Leste (PGET) kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, dikutip dalam telegram dari Misi AS di PBB New York kepada Menteri Luar Negeri di Washington, 23 Desember 1975; juga lihat Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya*, hal. 56.
349. Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
350. Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya*, hal. 59.
351. Lihat David Scott, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional. 15-17 Maret 2003; juga lihat Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984, hal 15, 23; Dunn 2004, hal 244.
352. Lihat Conboy, *Kopassus*, hal. 256.
353. Antonio Serpa dan Monis da Maia, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15 - 18 Desember 2003.
354. Wawancara CAVR dengan Humberto Martins da Cruz, mantan kepala penjara Aileu, Dili, tidak bertanggal.
355. Ibid
356. Ibid; juga lihat Alexandre da Costa Araújo, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
357. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
358. Wawancara CAVR dengan Tomas Gonçalves, mantan pemimpin Partisan dan Apodeti, Farol, Dili, 23 Oktober 2003.
359. Wawancara CAVR dengan João da Costa, mantan tahanan UDT, Same, 24 Juni 2003.
360. Monis da Maia, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
361. Angelo Araújo Fernandes, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
362. ABRI/ TNI, *25 Tahun Kodam XIV Hasanudin, 1957-1982* (tidak ada informasi bibliografi).
363. Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, *50 Tahun Emas Pengabdian TNI Angkatan Udara*, Jakarta, (tidak bertanggal), hal. 134.
364. Data dalam paragraf ini diambil dari *35 Tahun Darma Bakti Kostrad* (tidak tersedia informasi bibliografi), hal. 82.
365. Lihat, misalnya, Manuel Carceres da Costa (mengenai Kota Laclou di Distrik Manatuto) dan Fransisco Soares Pinto (mengenai Kota Iliomar di Distrik Lautém), kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
366. Laporan yang diterbitkan dalam *The Canberra Times*, 27 November 1979, dikutip dalam Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, hal. 259.
367. Lihat, misalnya, Julio Alfaro dan Maria José Franco Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemencaraan Politik, 17-18 Februari 2003.

368. Lihat kesaksian Mari Alkatiri sebagai tokoh sejarah pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003, dan kesaksian Marito Reis pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
369. Lihat Xanana Gusmão, *To Resist Is To Win*, Aurora Books, Victoria, 2000, hal. 41-43.
370. Ibid, hal. 42.
371. Bapa Leoneto do Rego, petikan dari wawancara tahun 1980, disampaikan dalam Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
372. Manuel Carceres da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
373. Lihat Pernyataan HRVD 5028, 3160, 0160, 2056.
374. Clementino Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
375. Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
376. Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya*, hal. 18.
377. Lihat Mario Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15 – 18 Desember 2003.
378. *Tempo*, 36 Juni 1976, dikutip dalam Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, hal. 97.
379. Laporan Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Timor-Leste, No. Pem.1/8/26, 26 Juni 1976, dimuat dalam Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya*, hal. 111.
380. Kesaksian US Rear Admiral Gene R. La Roque, Audiensi Kongres AS, 10 Juni 1980; juga lihat Budiardjo, hal. 27; John Taylor, *East Timor: The Price of Freedom*, Zed Books, London dan New York, 1999, hal. 84.
381. Wawancara CAVR dengan Albino do Carmo, mantan komandan Falintil Suai, Covalima, 31 Oktober 2003.
382. Wawancara CAVR dengan José Pereira, Lolotoe, Bobonaro, 29 Oktober 2003.
383. Telegram, Kedutaan Besar Amerika Jakarta kepada Menteri Luar Negeri di Washington, *GOI request for help in Timor*, 29 April 1976.
384. Wawancara dengan Taur Matan Ruak, mantan komandan Falintil, Bagian II, Dili, 14 Juni 2004.
385. Dunn, *Timor: A People Betrayed*, 1983, hal. 280; Conboy, *Kopassus*, hal. 274.
386. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004; lihat Bab 5: Resistensi Struktur dan Strategi.
387. Gilman dos Santos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
388. Departemen Pertahanan-Keamanan, *Petunjuk Pelaksanaan Nomor JUKLAK/06/V/1976 tentang Kegiatan di bidang Operasi Tempur Tahun 1976/1977*
389. Dinas Penerangan Korps Marinir, *Korps Marinir TNI AL 1970-2000*, Jakarta, 2000, hal. 233.
390. Indonesian Withdrawal Way to Peace," *East Timor News*, 2 Juni, 1977, hal. 1.
391. "Fretilin Ready for Offensive," *East Timor News*, 16 Juni, 1977, hal. 1.
392. *East Timor News*, 19 Mei, 1977, hal. 4.
393. Telegram, Menteri Luar Negeri di Washington kepada Kedutaan Besar Amerika Jakarta, *Report of Wolff Sub Committee on visit to Indonesia*, 28 Juni 1977.
394. Memorandum, Mike Armacost kepada Zbigniew Brzezinski, *Initiatives to Deepen Relations with Indonesia*, 14 Juni 1977.
395. Lihat Menteri Luar Negeri di Washington kepada semua Pos Diplomatik Asia Timur dan Pasifik, weekly status report—*Thailand, Indonesia, Malaysia, Burma and Singapore*, 23 Maret 1978; juga lihat telegram, Kedutaan Besar AS Jakarta kepada Sekretaris Negara Washington, *Preparation of Congressional Presentation Document (CPD) FOY 1979 Security Assistance Program*, 16 Desember 1977; juga lihat telegram, Kedutaan Besar Amerika Jakarta kepada Menteri Luar Negeri di Washington, *A4 sales to Indonesia*, 12 Mei 1978.

396. Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 78.
397. Budiardjo and Liem, *The War in East Timor*, hal. 30.
398. Komunike, *Douglas J Bennet Jr, Assistant Secretary for Congress Relations to the Hon. Frank Church, Chairman, Committee on Foreign Relations, US Senate*, 6 April 1979.
399. Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 95.
400. Lihat Chamberlain, *The Struggle in Iliomar: Resistance in Rural East Timor*, Point Lonsdale, Australia; 2003, hal. 11.
401. Lihat wawancara dengan CAVR Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004; juga lihat wawancara CAVR dengan José da Conceição, Kupang, 24 Agustus 2004; juga lihat wawancara CAVR dengan Sera Malik, Soe, Timor Barat, 28 Agustus 2004.
402. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
403. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 July 2004; lihat juga Gusmão, *To Resist*, hal. 130-131.
404. Budiardjo and Liem, *War Against East Timor*, hal. 61.
405. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
406. Nossa Vitoria e Apenas Questao de Tempo, Comunicado Comite Permanente do C.C. da FRETILIN, tertanggal 14 September 1997, mengenai pengkhianatan Xavier do Amaral, Lisabon, 1977, hal. 7-27
407. Lihat Domingos Maria Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003, dan Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
408. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004; juga lihat Gusmão, *To Resist*, hal. 47.
409. Kedutaan Amerika Lisabon kepada Menteri Luar Negeri di Washington, "Fretilin coup may postpone UNGA East Timor debate", 20 September 1977.
410. Domingos Maria Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
411. Antônio Amado J.R. Guterres Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
412. Carmel Budiardjo and Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, 1984, hal. 27.
413. "Victory is ours! Offensive Defeated," East Timor News, 8 September 1977, hal. 1, mengutip siaran Radio Maubere, *The Age*, 31 Agustus 1977, dan Melbourne Australia dan *The Australian*, 5 Agustus, 1977.
414. "Foreign Affairs gag on Timor build-up," *The Australian*, 1 September 1977; juga lihat James Dunn, *Timor: A People Betrayed*, 1983, hal. 312.
415. Lihat "Border Zone Offensive Meets Big Defeat," East Timor News, 20 Oktober 1977, hal. 1.
416. Wawancara CAVR dengan Carlos Tilman, Suai, 31 Oktober 2003.
417. Dinas Penerangan Korps Marinir, *Korps Marinir TNI AL 1970-2000*, Jakarta, 2000, hal. 236-237.
418. Manuel Carceres da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
419. Lihat Kesaksian Manuel Carceres da Costa dari Distrik Manatuto, João Serano dari Distrik Covalima, Maria José da Costa dari Distrik Manatuto dan Manufahi, pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
420. "Suharto Gambles on Wet Season Offensive," East Timor News, 15 Desember 1977, hal. 1.
421. Ibid.
422. Wawancara CAVR dengan Duarte Gaspar Corte Real, Ainaro, 22 Oktober 2003; Wawancara CAVR dengan Francisco Piedoso Martins, Ainaro, 22 Oktober 2003.
423. Wawancara CAVR dengan Francisco Barros, Ainaro, 22 Oktober 2003.

424. Maria José da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
425. Budiardjo dan Liem, *War Against East Timor*, hal. 30.
426. *Ibid*, hal. 30.
427. CAVR, Wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili 7 Juli 2004.
428. CAVR, Dokumen penelitian tentang ABRI/TNI. Arsip CAVR. Lihat juga Bagian 6: Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia mengenai pola-pola statistik dari pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan sekitar periode ini.
429. Douglas Kammen, Submisi kepada CAVR, wawancara dengan mantan perwira Kostrad yang bertugas di Timor-Leste pada 1977-1978, nama dirahasiakan, Indonesia [tidak bertanggal].
430. Lihat, misalnya, Wawancara CAVR dengan Abilio Quintão Pinto, Iliomar, Lautém, 7 Oktober 2003; juga lihat Wawancara CAVR dengan Teotonio [tidak ada nama belakang], Ossu, Viqueque 2 Oktober 2003.
431. Pernyataan HRVD 3889.
432. Wawancara CAVR dengan Tomas Soares da Silva, Uatolari, Viqueque, 4 Oktober 2003.
433. Xanana Gusmão, *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão*, ed. Sarah Niner, Aurora Books, Victoria, 2000, hal. 56.
434. Dunn, *A People Betrayed*, hal. 280; Conboy, *Kopassus*, hal. 274.
435. Lihat kesaksian Pat Walsh dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
436. Lihat Abilio dos Santos Belo, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
437. Dinas Penerangan Korps Marinir, Korps Marinir TNI AL 1970-2000, Jakarta, 2000, hal. 276-279.
438. Lihat Edmundo da Cruz, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
439. Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 96.
440. Wawancara CAVR dengan Taur Matan Ruak, mantan komandan Falintil, Bagian II, Dili 14 Juni 2004.
441. Xanana Gusmão, *To Resist is to Win*, ed. Sarah Niner, hal. 59.
442. Association of Ex-Political Prisoners (Assepol), submisi kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
443. Lihat Lennox, *Fighting Spirit of East Timor* hal. 133 dan 155-157; lihat juga Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 84.
444. Gilman dos Santos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
445. Lihat Petunjuk Teknis ABRI/ TNI No. Juknis/05/1/1982 Sistem keamanan kota dan wilayah pemukiman, dikutip dalam Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 183; Juga lihat Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan.
446. USAID, *East Timor-Indonesia, Displaced Persons, Situation Report No 1*, 9 Oktober 1979, dikutip dalam Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 88; juga lihat CRS Final report, hal. 3.
447. Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 89, 90.
448. ABRI/ TNI Juknis/04-B/IV/1982 Tentang Cara Mengamankan Masyarakat dari Pengaruh Propaganda GPK; dikutip dalam Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 216-17.
449. Lihat, misalnya, Francisco Soares Pinto dari subdistrik Iliomar di Lautém, Manuel Carceres da Costa dalam hubungannya dengan kamp di Metinaro, dan Abilio dos Santos Belo dalam kaitannya dengan kamp di Ainaro dan situasi di Desa Mau Chiga, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli, 2003.
450. Lihat Xanana Gusmão, *To Resist is to Win*, ed. Sarah Niner, hal. 59; Lihat juga Pernyataan HRVD 9188-02, 0187-01, 7800-02, 8088-05.
451. Pernyataan HRVD 8274-04.

452. Bekas pejabat CRS Gilman dos Santos, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
453. Pat Walsh, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
454. Ibid.
455. Gilman dos Santos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
456. Pat Walsh, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
457. Gilman dos Santos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
458. Catholic Relief Services-USCC East Timor Emergency Program, Laporan Akhir, Juni 1979-Desember 1980, hal. 11 dan 19.
459. Pat Walsh, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
460. Gilman dos Santos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
461. Lihat, misalnya, Joana Pereira dari Sub distrik Quelicai, Baucau, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
462. Bernardo Villanova, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
463. Rosalina da Costa dari Manufahi, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
464. Abilio dos Santos Belo, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
465. Maria de Ceu Lopes Federer Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
466. Ibid
467. Berita Reuters dan AP, 4 Maret 1982, dikutip dalam Timor Information Service, No. 35, Maret/April 1982, hal 6.
468. Lihat, misalnya, Abilio dos Santos Belo dan Marito Reis, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
469. Departemen Penerangan Republik Indonesia, East Timor After Integration, 1983, hal 88.
470. Maria de Ceu Lopes Federer, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
471. Ibid.
472. "Berita Buana", 14 Juli 1982, dalam Pengungkapan Kebenaran Timor-Leste; juga lihat kesaksian Mario Carrascalão pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, 28-29 April 2003.
473. Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 195.
474. Timor-Leste Dalam Angka, Biro Pusat Statistik Provinsi Timor-Timur, 1981.
475. Costa Alves dan Moreira Reis, wawancara dengan pastor Katolik asal Portugal, Fr Leoneto do Rego, diterbitkan di majalah *Funu* di Portugal pada Juli 1980.
476. Ibid.
477. Lihat submisi Assepol pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
478. Lihat, misalnya, Julio Alfaro, Maria da Silva, dan Maria José Franco Pereira, kesaksian-kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
479. Telegram, Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, Reports of Fretilin attacks in East Timor capital, 18 Juni 1980.

480. Wawancara CAVR dengan Bernardino Vilaova, Ataúro, Dili, 7 Maret 2002.
481. Telegram, Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, [disensor] Impressions after Juni 10 attack in East Timor, 25 Juni 1980.
482. Lihat, misalnya, Bernadino Villanova, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemerintahan Politis, 17-18 Februari 2003.
483. Pernyataan HRVD 2399 dan 0663; wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 20 Juni 2003, wawancara CAVR dengan Francisco Soares, Dili, 5 Agustus 2003.
484. Lihat Angkatan Bersenjata, 26 Februari 1982; Juga lihat Conboy, *Kopassus*, hal. 297.
485. Komando Daerah Militer XVI/Udayana, Komando Resor Militer 164/Wira Dharma, Instruksi - Operasi No: INSOP/03/II/1982
486. Lihat Xanana Gusmão, surat tertanggal 10 Mei 1983, hal. 3.
487. Lihat "Petunjuk Tehnis [sic] Nomor Juknis/05/II/1982, Sistem Keamanan Kota dan Daerah Pemukiman, hal. 3, yang menyebutkan "Perintah Operasi Korem 164/WD: 08/Kikis-D." Disalin ulang dalam Budiardjo dan Liem, *War In East Timor*, hal. 183.
488. Petunjuk Teknis ABRI/ TNI No. JUKNIS/06/IV/1982, Babinsa/TPD Activity in Developing and Phasing out Trained People's Resistance Forces, disalin dalam Budiardjo dan Liem, hal. 238.
489. "Instruksi – Operasi No: INSOP/03/II/1982," hal. 8.
490. Lihat Korps Marinir TNI AL, 1970-2000, Dinas Penerangan Korps Marinir, Jakarta, 2000, hal. 274.
491. Wawancara CAVR dengan Anselmo Fernandes Xavier, Lospalos, Lautém, 10 Oktober 2003.
492. Informação sobre a situação socio-humana nas zonas de Ossu, Viqueque, Uato-Lari e Uato-Carabau Abril 1982, hal. 4, Dokumen resistensi tertanggal 5 Mei 1982, Dili. [Informasi mengenai situasi sosial di wilayah ossu, Viqueque, Uatolari, dan Uato Carbau pada April 1982] tidak diterbitkan, Arsip CAVR
493. "Timor:Tales of Torture", *The Age*, Melbourne, 14 Mei 1982, disebutkan dalam Taylor, hal. 111; juga lihat Lennox, *Fighting Spirit*, hal. 172; juga lihat telegram, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, Briefing on the Military Situation in East Timor, 17 November 1981.
494. "Is There Enough to Eat in East Timor?," *Asian Wall Street Journal*, 21 Juni 1982.
495. Xanana Gusmão, "Message to the 37th United Nations General Assembly", dalam Sarah Niner (Ed), *To Resist*, hal. 81.
496. Telegram, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, Briefing on the Military Situation in East Timor, 17 November 1981.
497. Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 174; Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 101.
498. Wawancara CAVR dengan Albino da Costa, Dili, Juni 2003.
499. Pernyataan HRVD 2092.
500. Wawancara CAVR dengan Albino da Costa, Dili, Juni 2003.
501. Wawancara CAVR dengan Antonio dos Santos, Mehara, Tutuala, Lautém, 10 Oktober, 2003.
502. Wawancara CAVR dengan João Fuas de Carvalho, Tutuala, Lautém, 10 Oktober, 2003.
503. Lennox, *Fighting Spirit of East Timor*, hal. 175.
504. Alfredo Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Anak-anak dan Konflik, 28-29 Maret 2003.
505. Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 174.
506. Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 117.
507. Lennox, *Fighting Spirit of East Timor*, hal. 180. juga lihat Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 152.
508. *Ibid*, hal. 181.
509. Timor Information Service, No. 38, Sept/Okt 1982, hal. 7: World Council of Churches Visit, 3-6 Juni 1982.
510. Telegram, 17 November 1981, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, Briefing on the Military Situation in East Timor.

511. Lihat, misalnya, kesaksian dari Maria Ceu Federer Lopes pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Tahanan Politik 17 – 18 Februari 2003.
512. Lihat Joana Pereira dari Quelicai, Manuel Carceres da Costa dari Laclo, dan Edmundo da Cruz dari Lautém, kesaksian lisan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
513. Catholic Relief Services-USCC, East Timor Emergency Program, Laporan Akhir, Juni 1979-Desember 1980, hal. 3.
514. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
515. Xanana Gusmão, *To Resist is To Win!*, ed. Sarah Niner, hal. 58.
516. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
517. Xanana Gusmão, *To Resist is To Win!*, ed. Sarah Niner, hal 61.
518. *Ibid*, hal. 63.
519. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004; juga lihat Paulino Gama, “Fretilin Commander Remembers”, dalam Peter Carey (Ed), *East Timor at the Crossroads*, Cassell, New York, 1995, hal. 101.
520. Lihat Xanana Gusmão, *To Resist is to Win!*, ed. Sarah Niner, hal. 64; juga lihat wawancara dengan Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin [radio], Taibessi, Maret 2002 [CD No.18].
521. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
522. *Ibid*
523. Francisco Guterres, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik 1974-76, 15-18 Desember 2003.
524. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
525. *Ibid*
526. Chamberlain, *The Struggle in Illiomar*, hal. 18.
527. Xanana Gusmão, *To Resist is to Win*, ed. Sarah Niner, hal. 68.
528. Wawancara CAVR dengan Justo Talenta, yang ketika itu merupakan sekretaris informasi Brigada Vermelha, Dili, 3 November 2003; juga lihat kesaksian Francisco (Lu Olo), pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
529. Lihat wawancara CAVR dengan Cornelio Gama (L-7), Baucau, 9 April 2004; wawancara CAVR dengan Justo Talenta, Dili, November 2004; wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Juni 2004; juga lihat; wawancara CAVR dengan Francisco Guterres (Lu Olo), Dili, 26 Maret 2003; wawancara CAVR dengan Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin [radio], Taibessi, Maret 2002 [arsip CD no. 18].
530. “Rejustamento Estrutural da Resistência e Proposta de Paz” [Penyesuaian Struktural Resistensi dan Usulan Perdamaian, terjemahan bahasa Tetum CAVR, tidak ada keterangan penerbitan]; juga lihat wawancara dengan Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin [radio], Taibessi, Maret 2002 [arsip CD. No.18]; juga lihat Agio Pereira, “The National Council of Maubere Resistance (CNRM), overview of the history of the struggle of East Timor”, kertas kerja, disampaikan pada konferensi di Sydney, 1994, tanpa tanggal.
531. Lihat wawancara CAVR dengan Cornelio Gama, Baucau, 9 April 2003; juga lihat wawancara CAVR dengan Francisco Guterres (Lú Olo), Dili, 26 Maret 2003.
532. Pesan kepada Bangsa oleh Yang Terhormat Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, pada Peringatan Hari Jadi di Uaimori, 20 Agustus 2003, di <http://www.etan.org/et2003/august/17-23/20fal.htm>. Arsip CAVR
533. Wawancara CAVR dengan Julio Maria de Jesus, mantan Falintil, Lospalos, Lautém 29 Mei 2003; juga lihat Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, hal. 70. Lihat juga bab 5: Resistensi: Struktur dan Strategi.
534. Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, hal. 170.
535. Juknis/04-B/IV/1982 ABRI/TNI tentang Cara Mengamankan Masyarakat dari Pengaruh Propaganda GPK; terjemahan dikutip dalam Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, hal. 216-17.

536. Pernyataan HRVD 7816-01, 3315-01, 7250-01; juga lihat Aditjondro, In the Shadow of Mt Ramelau, hal. 83; juga lihat kesaksian Olga da Silva Amaral pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Perempuan dan Konflik, 28-29 April, 2003.
537. Lihat wawancara CAVR dengan Horacio La Hakiduk, Dili, 2 Juni 2003; dengan Albino da Costa, Dili Juni 2003; serta dengan Antônio Amaral da Costa Aitahan Matak, 28 April 2004.
538. Lihat Juknis ABRI/ TNI tentang Cara Babinsa/TPD dalam membongkar Jaringan Pendukung GPK, Korem 164, Seksi Intel, [tanggal tidak jelas, di antara setumpuk dokumen yang diperoleh Falintil pada 1982; arsip CAVR].
539. Lihat Rowena Lennox, *Fighting Spirit of East Timor: The Life of Martinho da Costa Lopes*, Zed Books, London and New York, 2000, hal. 189-191.
540. Lihat kesaksian Domingos de Oliveira pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
541. Agio Pereira, "The National Council of Maubere Resistance (CNRM), overview of the history of the struggle of East Timor" kertas kerja.
542. "Fretilin Explains Why No Negotiations" East Timor News, Australia, No. 36, 29 Juni 1978; juga lihat Francisco Guterres (Lu Olo), kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
543. Lihat wawancara CAVR dengan Francisco Guterres (Lu Olo), 26 Maret 2004; wawancara dengan Cornelio Gama, 9 April 2003; wawancara dengan Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin [radio], Taibessi, Maret 2002 [arsip CD No. 18].
544. Lihat wawancara CAVR dengan Cornelio Gama, Baucau, 9 April 2003; juga lihat wawancara CAVR dengan Taur Matan Ruak, Dili, 14 Juni 2004; wawancara CAVR dengan Francisco Guterres (Lu Olo), Dili, 26 Maret 2003; dan wawancara dengan Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin [radio], Taibessi, Maret 2002 [arsip CD No.18].
545. Patrick A. Smythe, *The Heaviest Blow—The Catholic Church and the East Timor Issue*, LIT, Jerman, 2004, hal. 45.
546. Lihat Dr Jose Ramos-Horta, pidato penutupan dalam acara CAVR, Audiensi Publik tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
547. Kohen, *The Place of the Dead*, hal. 150.
548. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, h. 40.
549. Biro Statistik Timor-Timur, *Timor-Timur Dalam Angka 1981*, Dili, 1981, hal. 71.
550. Pusat Dokumentasi Internasional (International Documentation Centre-IDOC), Roma, Pendahuluan, hal.1-2, *Pro Mundo Vita Dossier 'East Timor'*, 1984, Brussel, hal.36-7, dikutip dalam Smythe, *The Heaviest Blow*, hal. 39.
551. Lihat Ken Conboy, *Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces*, Equinox Publishing, Jakarta dan Singapura, 2002, hal. 298; juga lihat "Record of Meeting with Governor of Timor Timur (East Timor) on 28 July 1983, to Government Office, Dili", dalam *Official Report of the Australian Parliamentary Delegation to Indonesia*, yang dipimpin oleh Yang Mulia W. L. Morrison, Anggota Parlemen, Juli-Agustus 1983," hal. 152.
552. Peter A. Rohi, "Hanya Dengan 1 Pistol di Pinggang Kotak Suara Dikawal Ke Los Palos [sic]," *Sinar Harapan*, 1 Juni 1982.
553. Wawancara CAVR dengan Tomas Soares da Silva, Dili, 4 Oktober 2003.
554. A. Goldstone, wawancara dengan Jacobs, Lisabon, 4 Agustus 1982 [Arsip CAVR].
555. Telegram, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika di Washington, East Timor Governor address to Jakarta political officers luncheon, 29 April 1983.
556. Xanana Gusmão, "Message to the 37th UN General Assembly, 14 Oktober 1982" disalin dalam Xanana Gusmão *To Resist is to Win*, ed. Sarah Niner, hal. 82
557. Lihat Abilio dos Santos Belo, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
558. Lihat Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 146-7.
559. Wawancara CAVR dengan João Fuas de Carvalho, mantan pegawai Fretilin, Tutuala Lautém, 10 Oktober 2003.

560. Ernest Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, 2003, catatan kaki hal. 22.
561. Lihat Chamberlain; juga lihat wawancara CAVR dengan João Fuas de Carvalho, Tutuala, Lautém, 10 Oktober 2003; juga lihat Wawancara CAVR dengan Aleixo Ximenes, Venilale, Baucau, 2 Februari 2003.
562. Wawancara CAVR dengan Aleixo Ximenes, seorang mantan anggota UDT, Venilale, 2 Februari 2004.
563. Wawancara CAVR dengan Daniel Amaral, mantan anggota Hansip, Venilale, 3 Oktober 2003.
564. Lihat Jill Jolliffe, *Timor: Terra Sangrenta*, O Jornal, Lisbon, 1989, hal. 163-170.
565. Lihat wawancara CAVR dengan Cornelio Gama (L-7), 9 April 2004; juga lihat wawancara CAVR dengan Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 29 Maret 1984.
566. Telegram, *Negotiations to End Insurgency in East Timor*, 11 Juni 1983, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika di Washington.
567. Official Report of the Australian Parliamentary Delegation to Indonesia, yang dipimpin oleh Yang Mulia W. L. Morrison, anggota parlemen (M.P), Juli-Agustus 1983.
568. Wawancara CAVR dengan Constantino dos Santos, mantan anggota Falintil Macadique, 26 Juni 2003; Juga lihat Francisco (Lu Olo) Guterres, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
569. J. Jolliffe, ed., *Timor Newsletter*, Vol. II, No. 3, Oktober 1983, hal. 6, dikutip dalam Ernest Chamberlain, *The Struggle in Iliomar: Resistance in Rural East Timor*, 2003, hal. 23.
570. Lihat wawancara CAVR dengan Francisco (Lu Olo) Guterres, Dili, 26 Maret 2004; dengan Albino da Costa, Juni 2003; dengan Taur Matan Ruak, bagian II, Dili, 14 Juni 2004
571. Lihat Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 131-5.
572. Lennox, *Fighting Spirit of East Timor*, hal. 215.
573. *Ibid*, hal. 185.
574. Patrick A. Smythe, *The Heaviest Blow The Catholic Church and the East Timor Issue*, hal. 38.
575. Ben Anderson, Arief Djati, dan Douglas Kammen, "Wawancara dengan Mário Carrascalão," *Indonesia* 76, Oktober 2003, hal. 7-8.
576. Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984, hal. 139 dan 47.
577. Telegram, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, *Current developments in East Timor [tulisan tak jelas] on renewed fighting*, access by foreigners, etc, 23 September 1983.
578. Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, *Briefing on the military situation in East Timor*, 17 November 1981.
579. Lihat Conboy, *Kopassus*, hal. 310.
580. Ben Anderson, Arief Djati, dan Douglas Kammen, "Wawancara dengan Mário Carrascalão," *Indonesia* 76 (Oktober 2003), hal. 8.
581. Telegram, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, *Negotiations to End Insurgency in East Timor*, 11 Juni 1983.
582. Lihat "Translation of Letter from Fretilin by K. Reppter (Canberra)", dalam *Official Report of the Australian Parliamentary Delegation to Indonesia*, led by honourable W. L. Morrison, M.P , Juli-Agustus 1983, hal. 169-170.
583. Lihat pernyataan HRVD 6957-01; 5330-01; 2369-02; 6205-01; 39977-01; 5344-02.
584. Laporan Tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang Indonesia, 1983, hal. 109.
585. Francisco (Lu Olo) Guterres, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
586. Wawancara CAVR dengan José Gomes, kepala desa Bibileo-Lalerek Mutin, Lacluta Viqueque, 13 Desember 2003.
587. Telegram, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, *Views on East Timor Developments*, 9 September 1983; juga lihat wawancara CAVR

- dengan José Gomes, kepala desa Bibileo-Lalerek Mutin, Lacluta Viqueque, 13 Desember 2003; juga lihat Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 142.
588. Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, *Current developments in East Timor [tulisan tak jelas] on renewed fighting, access by foreigners, etc*, 23 September 1983.
589. Timor Information Service, *Gough Whitlam Fails to Convince*, Maret/April 1982, hal. 10.
590. "Timor Bishop Accuses Military of Massacring 84 Villagers", Peter Millership, Reuters, Dili, 1 Maret 1984, dikutip dalam Taylor, *East Timor*, hal. 147.
591. Wawancara CAVR dengan José Gomes, Kepala Desa Bibileo-Lalerek Mutin, Lacluta, Viqueque, 13 Desember 2003.
592. Juga lihat Olinda Pinto Martins, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, November 2003.
593. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, *Current developments in East Timor [tulisan tak jelas] on renewed fighting, access by foreigners, etc*, 23 September 1983.
594. Moerdani, artikel di Surat Kabar Sinar Harapan, 17 Agustus 1983, dikutip dalam Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 143.
595. Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 139.
596. Telegram, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, [tulisan tak jelas] *Views on East Timor Developments*, 9 September 1983.
597. ACFOA, *East Timor Report No. 5*, November 1983.
598. "Letter to Bello from Indonesian Bishops Conference, 1983", disalin dalam *Just Reading No 2., The Church And East Timor, Komisi Katolik untuk Keadilan, Pembangunan, dan Perdamaian 1993*, hal. 18; juga lihat Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 154.
599. Lihat Xanana Gusmão, *To Resist is to Win! The Autobiography of Xanana Gusmão*, (ed) Sarah Niner, hal. 85-126.
600. *Ibid*, hal 129-136.
601. Wawancara CAVR dengan Antônio Tomàs Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 18 Desember 2003; lihat wawancara CAVR dengan Avelino Coelho, 17 Juli 2004; juga lihat Pinto dan Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle*, Boston: South End Press, 1997, hal. 122.
602. Pinto dan Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance*, South End Press, hal. 123.
603. Lihat Abel Guterres, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
604. Suster Monica Nakamura, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
605. Lihat Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak) dan Mariano Soares, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pememajaan Politik, 17-18 Februari 2003.
606. Lihat Marito Nicolau dos Reis, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pememajaan Politik, 17-18 Februari 2003.
607. Ade Sitompul, kesaksian lisan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pememajaan Politik, 17-18 Februari 2003.
608. Wawancara CAVR dengan Aleixo da Silva Gama (Cobra), Dili, [wawancara tanpa tanggal]; Wawancara CAVR dengan Antônio Tomàs Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 18 Desember 2003; Wawancara CAVR dengan José Manuel Fernandes, Dili, 31 Oktober 2002; Wawancara CAVR dengan Avelino Coelho, Dili, 17 Juli 2004.
609. Wawancara CAVR dengan Avelino Coelho, Dili, 17 Juli 2004; wawancara CAVR dengan Gregório Saldanha, Dili, 6 Mei 2004; serta wawancara CAVR dengan Octavio da Conceição, Dili, 3 November 2002.
610. Wawancara CAVR dengan João Freitas da Câmara, Dili, 5 Juni 2004.
611. *Ibid*

612. Lihat Arnold S. Kohen, *From the Place of the Dead: Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, hal. 161.
613. *Ibid*, hal.151-152.
614. *Ibid*, hal.166; juga lihat Mário Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, 28-29 April 2003.
615. Kohen, *From the Place of the Dead*, hal. 167.
616. Kohen, *From the Place of the Dead*, hal. 169.
617. *Ibid*, hal.169-173.
618. Resolusi Sidang Umum PBB No. 37/30, 1982.
619. Francisc Vendrell, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional 15-17 Maret, 2004.
620. Ian Martin, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 17 Maret 2004.
621. Francisc Vendrell, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional 15-17 Maret, 2004.
622. Kohen, *From the Place of the Dead*, hal. 177.
623. *Ibid*, hal.178.
624. Lihat Gregorio Saldanha, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemerintahan Politik, 17-18 Februari 2003.
625. Constancio Pinto, "The Student Movement and the Independence Struggle in East Timor: An Interview" dalam Richard Tanter, Mark Selden dan Stephen R Shalom (Eds), *Bitter Flowers, Sweet Flowers, East Timor, Indonesia and The World Community*, London, Rowman & Littlefield Publishers Inc., hal. 34.
626. Lihat, misalnya, wawancara CAVR dengan José Manuél, Dili, 31 Oktober 2002; dan wawancara CAVR dengan Fernanda Soares, Kaikoli, Dili, 21 Januari 2003.
627. Wawancara CAVR dengan Gregório Saldanha, Dili, 6 Mei 2004; juga lihat Wawancara CAVR dengan Octavio da Conceição, Dili, 3 November 2002.
628. Wawancara CAVR dengan Gregório Saldanha, Dili, 6 Mei 2004.
629. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 62 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur Triwulan IV, 1988, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal 1103-05.
630. East Timor: Keeping the Flame of Freedom Alive, ACFOA Development Dossier No. 29, Februari 1991.
631. Lihat Yeni Rosa Damayanti dan Nugroho Katjasungkana, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
632. "A Message to Catholic Youth in Timor-Leste and Students from Jakarta", 20 Mei 1986, disalin dalam Xanana Gusmão, *To Resist is to Win!*, (ed) Sarah Niner hal. 109-110.
633. Kesaksian Francisc Vendrell pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
634. Pidato Penutupan José Ramos-Horta pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
635. Constâncio Pinto dan Matthew Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance*, South End Press, Kata Pengantar.
636. Kesaksian Simplicio Celestino de Deus pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian 19-21 November 2003.
637. Kesaksian Max Stahl pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian 19-21 November 2003.
638. Kesaksian Simplicio Celestino de Deus pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
639. Lihat Kohen, *From the Place of the Dead*, hal 197-200.

640. Kesaksian Max Stahl pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
641. Kesaksian Alexandrino da Costa pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, 29-30 Maret 2004.
642. Wawancara CAVR dengan Avelino Coelho Silva, Dili, 17 Juli 2004; wawancara CAVR dengan João Freitas da Camara, Dili, 5 Juni 2004; juga lihat Pinto dan Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle*, hal. 196-197.
643. Lihat kesaksian Gregorio Saldanha pada Audiensi Publik Nasional CAVR, mengenai Pemenjaraan Politik 17-18 Februari 2003.
644. Kesaksian Luhut Pangaribuan dan Ade Rostina Sitompul pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
645. *East Timor After Santa Cruz: Indonesia and the international order*, disusun oleh Peace is Possible in East Timor, Ed. Penerbit Peace is Possible in East Timor, Lisabon, Januari 1993.
646. Tony Parkinson, "Hawk Blasts Jakarta Over Sick Remarks", *The Australian*, November 22, 1991; juga lihat kesaksian Pinto di hadapan Subkomite operasi Internasional dan Hak Asasi Manusia, Komite Hubungan Internasional, Dewan Perwakilan Rakyat, Kongres ke-105, Sesi kedua; Mei 7, 1998.
647. Pernyataan HRVD 02049.
648. Submisi Assepol pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
649. Pidato Xanana Gusmão pada Peresmian Kantor Pusat CAVR di bekas Penjara Balide, 17 Februari 2003.
650. Lihat Geoffrey Robinson, *East Timor 1999: Crimes Against Humanity – A Report Comissioned by the UN Office of the High Comissioner for Human Rights*, July, 2003, hal. 85 [Robinson, Submisi ONHCR kepada CAVR] Arsip CAVR.
651. AFP, *East Timor/Church*, Jakarta, 12 Juli 1994.
652. Amnesty International, *East Timor—Continuing Human Rights Violations*, 2 Februari 1995.
653. Kesaksian Alexandrino da Costa pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak-anak dan, 29-30 Maret 2004. Juga lihat artikel oleh Kieran Dwyer pada *Matebian News* April 1995, dipublikasikan oleh East Timor Relief Association (ETRA).
654. Kesaksian Ade Sitompul pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003; Submisi Assepol pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik 17-18 Februari 2003.
655. Nugroho Katjasungkana, Kesaksian Lisan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
656. Wawancara CAVR dengan Joaquim Fonseca, Dili, 23 Mei 2004; wawancara CAVR dengan Fernando de Araújo (Lasama), Dili, 5 Mei 2004; wawancara CAVR dengan Avelino Coelho, Dili, 17 Juli 2004.
657. Wawancara CAVR dengan Joaquim Fonseca, Dili, 23 Mei 2004; wawancara CAVR dengan Oscar da Silva, Dili, 23 Mei 2004.
658. Wawancara CAVR dengan Fernando de Araújo (Lasama), Dili, 5 Mei 2004.
659. Lihat kesaksian Yeni Rosa Damayanti pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
660. Lihat kesaksian Yeni Rosa Damayanti dan Nugroho Katjasungkana pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
661. Wawancara CAVR dengan Mariano Sabino Lopes, Dili, [wawancara tidak bertanggal].
662. Lihat wawancara CAVR dengan Virgilio da Silva Guterres, Dili, 21 Februari 2005; juga lihat wawancara CAVR dengan Avelino Coelho, 17 Juli 2004.
663. Wawancara CAVR dengan Virgilio da Silva Guterres, Dili, 21 Februari 2005.
664. Kompas, Jakarta 18 November 1995.
665. Wawancara CAVR dengan Naldo Rei, Dili 11 November 2003.
666. Wawancara CAVR dengan Mariano Sabino Lopes, Dili, 2004; juga lihat wawancara CAVR dengan Naldo Rei, Dili 11 November 2003.

667. Wawancara CAVR dengan Joaquim Fonseca, Dili, 23 Mei 2004.
668. Wawancara CAVR dengan Mariano Sabino Lopes, Dili, [tidak bertanggal].
669. Dunn, East Timor, 2003, hal. 338-339.
670. Kesaksian Francesc Vendrell pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
671. Kesaksian Suzannah Linton pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
672. Ibid
673. Pidato Hadiah Nobel Perdamaian, 10 Desember 1996, tersedia pada <http://nobelprize.org/peace/laureates/1996/presentation-speech.html>.
674. Pidato Penerimaan Hadiah Nobel Perdamaian Uskup Carlos Belo, 10 Desember 1996.
675. Kesaksian Francesc Vendrell pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
676. Ibid
677. Ibid
678. Jim Schiller, *The 1997 Indonesian Elections: Festival of democracy or costly fiction?*, Occasional Paper 22, Center for Asia Pacific Initiatives, University of Victoria, Mei 1999.
679. "Statement of the National Commission of Human Rights Concerning the Unrest in Jakarta and Surrounding Areas", Komnas HAM, Juni 2, 1998.
680. Don Greenless dan Robert Garran, *Deliverance: The Inside Story of East Timor's Fight for Freedom*, Allen & Unwin, Australia, 2002, hal. 28-29.
681. Dan Nicholson, "The Lorikeet Warriors: East Timor New Generation National Resistance 1989-1999", Tesis Sarjana, University of Melbourne, Oktober 2001, hal 38.
682. Wawancara CAVR dengan Basilio Dias Araújo, Kupang Timor Barat, 26 Juli 2004.
683. John Martinkus, *A Dirty Little War: An Eyewitness of East Timor's Descent into Hell 1997-2000*, Random House, Australia, 2001, hal. 54.
684. Komando Daerah Militer IX Udayana, Komando Resor Militer 164, "Rekapitulasi Kekuatan Personil Organik dan Penugasan", Juli 1998; lihat juga Komando Daerah Militer IX Udayana, Komando Resor Militer 164, "Rekapitulasi Kekuatan Personil Organik dan Penugasan Posisi, November 1997".
685. Komando Daerah Militer IX Udayana, Komando Resor Militer 164, "Kekuatan Personil Tim Tim Penugasan", Juli 1998.
686. Laporan dari Komisi Penyelidikan Indonesia mengenai berbagai kejahatan berat HAM yang dilanggar di Timor-Leste pada laporan 1999, (Laporan KPP HAM)), 31 Januari 2000, para. 68.
687. Lihat kesaksian saksi mata pada Audiensi Publik Nasional CAVR Rona Ami Nia Lian (Dengarkan Suara Kami) 11-12 November 2002.
688. Martinkus, *A Dirty Little War*, hal. 98.
689. Ibid, hal. 106.
690. Ibid, hal. 105; juga lihat KPP HAM, Report on East Timor, para. 68.
691. Lihat diskusi pada Geoffrey Robinson, "People's War: Militia in East Timor and Indonesia", *South East Asia Research*, 9, November 2001, hal. 296.
692. Lihat KPP HAM, Report on East Timor, para. 39; juga lihat Geoffrey Robinson, *East Timor 1999: Crimes Against Humanity—A Report Commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights*, Juli, 2003, hal. 90-93.
693. Lihat Samuel Moore, "The Indonesian Military's Last Years in East Timor: An Analysis of its Documents", *Indonesia* 72, Cornell South East Asia Program, Oktober 2001, hal. 31.
694. KPP HAM, Report on East Timor, para. 40 dan 49.
695. Robinson, *People's War*, hal. 276.
696. Laporan KPP HAM, para. 44; juga lihat Moore, "Indonesian Military's Last Years", hal. 30.
697. Laporan KPP HAM para. 48; juga lihat Robinson, *East Timor*, hal. 106.

698. Louise Williams, "Separatists fear bloodshed as military arms integrationists", Sydney Morning Herald, 28 Januari 1999; "Interview: Orders to Kill", Espresso, Lisbon, 17 September 1999.
699. KPP HAM, Report on East Timor, para. 47.
700. Danrem 164/WD ke Dandim 1627-1639. Telegram Rahasia No. TR/41/1999, Jan 28, dikutip dalam Robinson, East Timor, hal. 110; juga lihat KPP HAM, Report, para. 50.
701. Robinson, East Timor, hal. 98; KPP HAM Report on East Timor, para. 40.
702. KPP HAM Report on East Timor, para 54.
703. Ibid, para. 50.
704. Dikutip dalam Xanana Gusmão, To Resist is to Win—The Autobiography of Xanana Gusmão, (Ed) Sarah Niner, David Lovell Publishing, Melbourne 2000, hal. 233-234.
705. Dikutip dalam Ian Martin, Self-determination in East Timor: The United Nations, The Ballot, and International Intervention, Boulder, Lynne Rienner, 2001, hal. 21.
706. Alexander Downer, Konferensi Pers, Adelaide, 12 Januari 1999.
707. Susan Sim, The Straits Times, Singapura 2 Februari 1999, dikutip dalam Greenlees dan Garran, Deliverance-The Inside Story of East Timor's Fight for Freedom, Allen and Unwin, Sydney, 2002, hal. 93.
708. Moore, "Indonesian Military's Last Years", hal. 33.
709. Pemberitahuan kepada Pers tentang Timor-Leste, Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, 9 Februari, 1999, dikutip dalam Martin, hal. 24.
710. Lihat Lansell Taudevin, East Timor: To Little Too Late, Duffy & Snellgrove, Sydney, 2000, hal. 223.
711. Martinkus, A Dirty Little War, hal. 119.
712. Pesan CNRT kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, 26 Januari 1999 ditandatangani oleh Leandro Isaac, dikutip dalam Taudevin, East Timor, hal. 222.
713. Siaran Pers Falintil, "Falintil resumes their Mission in Defence of the People of East Timor" 5 April 1999, sebagian dikutip dalam Martin, hal. 30.
714. Robinson, East Timor, hal. 193; juga lihat KPP HAM, Report on East Timor, para. 104-114.
715. Ball Mcdonald (ed), Masters of Terror: Indonesia's Military and Violence in East Timor in 1999, Australian National University, Canberra, 2002, <http://yayasanhak.minihub.org/mot/cons92z%20-%20Eurico%20Guterres.htm>, pada Januari 2005.
716. KPP HAM, Report on East Timor, para. 119-121.
717. Lihat KPP HAM, Report on East Timor, para. 86-191; juga lihat Robinson, East Timor, Bab 10.
718. Tono Suratman, Untuk Negaraku, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 112 dan 118.
719. Lihat, misalnya, KPP HAM Report on East Timor para. 108 dan 119-121.
720. Martin, Self Determination, hal. 70.
721. Ibid, hal 31.
722. Ibid, hal 33.
723. Annex 3 pasal pada Persetujuan 5 Mei, dikutip dalam Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), East Timor in Transition 1998-2000—An Australian Policy Challenge, Canberra, 2001.
724. Surat José Ramos-Horta untuk Kofi Annan, dikutip dalam Greenlees and Garran, hal. 147.
725. Martin, Self Determination, hal. 33; juga lihat Francesc Vendrell dan Ian Martin, kesaksian pada Audiensi Publik CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
726. Moore, Indonesian Military's Last Years, hal 41.
727. Martin, Self Determination, hal. 60.
728. Annex II: Agreement Regarding the Modalities for the Popular Consultation of the East Timorese through a direct Ballot, Persetujuan 5 Mei disalin dalam Martin, Self Determination, hal. 144.
729. Martin, Self Determination, hal. 46.
730. Ibid, hal.93.

731. Ibid, hal 42.
732. Ibid, hal. 88.
733. Lihat Yeni Rosa Damayanti, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
734. Martin, Self Determination, hal. 71.
735. Geoffrey Robinson, East Timor 1999: Crimes Against Humanity—A Report Commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Juli, 2003, hal. 216.
736. KPP HAM, Report on East Timor, 31 Januari 2000, para 124; juga lihat Robinson, East Timor, hal. 63.
737. Martin, Self Determination, hal 71.
738. Ibid, hal 71.
739. Ibid, hal. 70.
740. Lihat Robinson, East Timor, secara umum; juga lihat KPP HAM, Report on East Timor, ; Lihat Julieta Jesuirina dos Santos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Anak-anak dan Konflik, 28-29 Maret 2004; juga lihat Bab Rekonsiliasi Komunitas, pada bagian mengenai latar belakang mandat CRP.
741. Surat Bupati Kepala Daerah Tk II Dili, Nomor 33 tahun 1999 tentang Pengamanan Swakarsa dan Ketertiban Kota Dili.
742. KPP HAM Report on East Timor para. 89; Moore, "Indonesian Military's Last Years", hal. 39.
743. Ross Coulthart, "Timor on the brink", Sunday Program, Channel 9, Sydney, Australia. Disiarkan pada Juni 1999.
744. Ian Martin, kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2003.
745. Robinson, East Timor 1999, hal. 210-213.
746. Kesaksian Ian Martin, pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2003.
747. Martin, Self Determination, hal. 48.
748. Laporan Sekretaris Jenderal, S/1999/803, 20 Juli 1999.
749. Ibid.
750. Martin, Self Determination, hal. 45.
751. Komisi Pemilihan, East Timor Popular Consultation. Determination: Registration of Voters, 25 August 1999, dikutip dalam Martin, Self Determination, hal. 61.
752. KPP HAM, Report on East Timor, para. 161.
753. Lihat Geoffrey Robinson, "People's War: Militia in East Timor and Indonesia", South East Asia Research, 9, November 2001, hal. 206.
754. Fernando de Araújo, "The CNRT Campaign for Independence" dalam James J. Fox dan Dionisio Babo Soares (Eds), East Timor: Out of the Ashes, Crawford House Publishing, Adelaide, 2000, hal. 111.
755. Wawancara CAVR dengan Agio Pereira, mantan Kepala CPCC National Department of Information., Arsip CAVR. Maret 2005.
756. Martin, ibid, hal 43.
757. Ibid, hal. 47.
758. Wawancara CAVR dengan Basilio Dias Araújo, mantan juru bicara FPKD, Hotel Astiti, Kupang Timor Barat, 26 Juli 2004.
759. Surat Gubernur No 200/827/SOSPOL/V/1999, tentang Tindakan terhadap PNS yang terlibat organisasi/kegiatan yang menentang Pemerintah RI, Dili 28 Mei 1999.
760. Robinson, East Timor, hal 35.
761. Surat Gubernur pada Bupati Liquiçá tertanggal 21 Mei 1999, koleksi Yayasan HAK, dikutip dalam Robinson, East Timor, hal 115.
762. Surat Gubernur 461/e.09/BIDRAM II/99 pada Bupati Lautém, Los Palos, Pengesahan Proposal

763. Martin, *Self Determination*, hal. 75.
764. Komando Resort Militer 164/Wira Dharma, *Rencana Operasi Wira Dharma-99*, Dili, Juli 1999. (Dokumen Yayasan Hak No. 34).
765. Tono Suratman, *Untuk Negaraku*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 51.
766. Martin, *Self Determination*, hal. 71.
767. *Ibid*, hal. 73.
768. "Clash Mars East Timor Registration", *The Jakarta Post*, 17 Juli 1999; "Fortilos: Situasi Dili 1/9/99 - 21:00", *SiaR*, 31 August 1999, dikutip dalam McDonald, Ball, et al, *Masters of Terror: Indonesia's Military and Violence in East Timor in 1999*, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University (Canberra Paper #145), 2002, tersedia di: <http://www.yayasanhak.minihub.org/mot/Timbul%20Silaen.htm>; juga lihat KPP HAM, Report, para. 172.
769. KPP HAM, Report on East Timor, para. 48; juga lihat Robinson, *East Timor*, hal. 39.
770. Don Greenless dan Robert Garran, *Deliverance-The Inside Story of East Timor's Fight for Freedom*, Allen and Unwin, Sydney, 2002, hal. 187.
771. Martin, *Self Determination*, hal. 84.
772. *Ibid*, hal. 90.
773. *Ibid*, hal. 90.
774. *Ibid*, hal. 90.
775. Dikutip dalam Greenlees, hal. 191.
776. Laporan dari Komisi Pemilihan dikutip dalam Martin, *Self Determination*, hal. 91
777. *Ibid*, hal. 90.
778. *Ibid*, hal. 93.
779. Electoral Commission Determination, Dili 4 September 1999, dan lihat Martin, *Self Determination*, hal. 157-160.
780. Ian Martin, *Self-determination in East Timor: The United Nations, The Ballot, and International Intervention*, Boulder (Col), Lynne Rienner, 2001, hal. 93.
781. Report on East Timur, KPP HAM, 31/01/2000, para. 72.
782. *Ibid*, para 161.
783. *Ibid*, para 81.
784. *Ibid*, para 181.
785. *Ibid*, para. 84 dan 85; juga lihat Robinson, *East Timor 1999: Crimes Against Humanity—A Report Commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights*, Juli, 2003, hal. 44.
786. Robinson, *East Timor 1999*, hal. 221.
787. KPP HAM, Report on East Timor, para. 131-135; juga lihat Robinson, *East Timor*, hal. 225.
788. *Ibid*, para. 139.
789. Samuel Moore, "The Indonesian Military's Last Years in East Timor: An Analysis of its Documents", *Indonesia 72*, Cornell South East Asia Program, Oktober 2001, hal. 31.
790. Feliciano Cardoso, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Perempuan dan Konflik, 28– 29 April 2003
791. Greenlees dan Garran, hal. 231.
792. Lihat pernyataan HRVD 3530-04; 6160; 6229; 6762; 6173-03; 4266; 8259; 2104-02; 8255; 1061-05; 0710; juga lihat KPP HAM, Report, para. 171.
793. Martin, *Self Determination*, hal. 97.
794. Report on East Timor, KPP HAM, VI.6.
795. *Ibid*, para 50.
796. *Ibid*, para 162.
797. Submisi kepada CAVR, wawancara David Hicks, Maxine Hicks dan Phyllis Ferguson dengan Virgilio Smith, 7 Juli 2005, Arsip CAVR.

798. Ibid.
799. Lihat pembahasan Bab 7.7: Kekerasan Seksual dan, misalnya, kesaksian BM, pada Audiensi Publik Nasional CAVR Rona Ami Nia Lian di CAVR (Dengarkan Kesaksian Kami) 11-12 November 2002.
800. Report on East Timor, KPP HAM, para 142; juga lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Maliana Indictment, Case No. 2003/18, para. 128-190.
801. Geoffrey Robinson, East Timor 1999: Crimes Against Humanity—A Report Commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Juli, 2003, hal. 185.
802. Kesaksian Ian Martin pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
803. Kesaksian Abel Guterres pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
804. Martin, Self Determination, hal. 104-105.
805. Lihat Martin, Self Determination, hal. 104-105; juga lihat kesaksian Martin pada Audiensi Publik Nasional CAVR dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
806. Kesaksian Ian Martin pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
807. Lihat Report on East Timor, KPP HAM, para. 87.
808. Martin, Self Determination, hal. 111.
809. Kesaksian Ian Martin pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
810. Martin, Self-determination, hal. 101.
811. Report on East Timor, KPP HAM, para. 98.
812. Ibid, para. 83. Martin, Self Determination, hal. 115.
813. Report on East Timor, KPP HAM, para. 164.
814. Human Rights Watch, Laporan mengenai Nusa Tenggara Timur, 1999.
815. Ibid.
816. Report on East Timor, KPP HAM, para. 151; juga lihat Pernyataan . General Prosecutor of the UNTAET, Indictment against Joni Marques, et.al., Kasus No. 2000/9, para. 33-40. Special Panel for Serious Crimes, Judgement, 11 Desember 2001. Tujuh anggota milisi termasuk Marques dinyatakan bersalah oleh Special Panel for Serious Crimes.
817. Martin, Self Determination, hal. 115.
818. Truk F (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan). Submisi yang disampaikan pada dengar pendapat publik CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, April 2003.
819. Human Rights Watch, Laporan mengenai Nusa Tenggara Timur, 1999.
820. Martin, Self Determination, hal. 97.
821. KPP HAM, Report on East Timor, para. 185.
822. Human Rights Watch, World Report 2001, East Timor, pada <http://www.hrw.org/wr2k1/asia/etimor3.html>.
823. Martin, Self Determination, hal. 115.



Chega!

Bagian

4.

Rezim pendudukan

Bagian 4. Rezim pendudukan

375 | Pendahuluan

376 | Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan perannya di Timor-Leste

376 | Pendahuluan

377 | Latar belakang ABRI

377 | Latar belakang sejarah ABRI dan TNI

378 | ABRI sebagai penyelamat bangsa

380 | Doktrin ABRI

380 | Struktur teritorial Angkatan Bersenjata Indonesia

382 | ABRI dan Polisi

382 | Pendanaan ABRI dan perannya dalam perekonomian Indonesia

384 | Reorganisasi ABRI pada masa Orde Baru

385 | Struktur organisasi ABRI di Timor-Leste

387 | Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja, Agustus 1975 - Agustus 1976

388 | Komando Daerah Militer Timor Timur, Agustus 1976 - Oktober 1978

390 | Komando Tugas Gabungan (Kogasgab) Operasi Seroja, Oktober 1978 - Maret 1979

391 | Korem 164/Wira Dharma, 1979 - 1999

391 | Komando Operasi Keamanan Timor Timur, 1984 - 1990

392 | Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) Timor Timur, 1990 - 1993

393 | Komando Regional Militer 164/Wira Dharma (Korem 164), 1993 - 1999

394 | Terus hadirnya pasukan tempur

395 | Komando Darurat Militer Timor Timur, September 1999

395 | Komando Darurat Militer dibubarkan: Satuan Tugas Indonesia di Timor Timur

396 | Militerisasi masyarakat Timor-Leste

396 | Pendahuluan

398 | Militerisasi Timor-Leste pra-Indonesia

399 | Militerisasi partai politik Timor-Leste oleh Indonesia sebelum pendudukan

401 | Pembentukan batalion tempur ABRI beranggotakan orang Timor-Leste

402 | Berbagai kelompok paramiliter awal, 1976 - 1981

403 | Paramiliter dekade 1980-an

404 | Pasukan pertahanan sipil

406 | 'Anggota militer triwulan', Milsas, 1989 - 1992

- 407 | Tenaga Bantuan Operasi (TBO)
- 408 | 'Intel'—mata-mata orang Timor-Leste
- 410 | Dekade 1990-an dan perhatian pada pemuda
- 411 | Pasukan pembunuh
- 412 | Milisi (1988 – 1999)
 - 415 | Pembentukan milisi
 - 416 | Keterlibatan TNI dalam pembentukan milisi-milisi
 - 419 | Dukungan TNI bagi milisi
 - 419 | Partisipasi TNI dalam kegiatan milisi
 - 420 | Pemberian pelatihan, persenjataan, dan dukungan operasional
 - 421 | Operasi gabungan TNI-milisi
 - 421 | Pemberian dukungan keuangan dan materi oleh TNI dan badan-badan lainnya
 - 422 | Konsekuensi kerjasama milisi-TNI

424 | Pemerintahan sipil

- 424 | Pemerintahan sementara di Timor-Leste
 - 425 | Kedudukan Gubernur
 - 427 | Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda)
 - 428 | Dewan Perwakilan Rakyat
 - 430 | Lembaga Administrasi Pemerintah: program nasional di tingkat provinsi
 - 433 | Pemerintah kabupaten dan kecamatan
 - 437 | Pemerintah tingkat desa
 - 438 | Layanan sipil

Daftar tabel:

- 386 | **Tabel 1** : Struktur komando militer di Timor-Leste
- 412 | **Tabel 2** : Milisi-milisi di Timor-Leste, 1975 - 1999
- 425 | **Tabel 3** : Struktur pemerintahan Indonesia, dengan satuan yang setara dalam sistem Portugis serta militer Indonesia
- 430 | **Tabel 4** : Komposisi anggota DPR Provinsi Timor Timur berdasarkan fraksi, 1980 - 1997
- 434 | **Tabel 5** : Bupati berdasarkan asal-usul dan afiliasi, 1976 - 1999

Rezim pendudukan

4.

Pendahuluan

1. Dari awal proses dekolonisasi oleh Portugal, menyusul Revolusi Anyelir pada April 1974, militer Indonesia mulai terlibat dalam masa depan Timor-Leste.* ABRI memaksakan penyelesaian militer atas masalah politik yang sedang berkembang, yang berakibat bencana bagi rakyat Timor-Leste. Kekhawatiran Indonesia atas Timor-Leste pascakolonial yang baru muncul tidak perlu berakibat pada intervensi militer jika pemimpin militer garis keras tidak memiliki posisi yang demikian dominan dalam rezim Orde Baru Presiden Soeharto. Begitu terjun dengan intervensi militer, ABRI mengambil peran utama dalam masa-masa awal pendudukan. Mereka meningkatkan kekerasan militer untuk mencapai tujuan politik penaklukan dan integrasi. Untuk melakukan hal ini, mereka membawa konflik ke setiap tingkat masyarakat Timor-Leste, melibatkan pria, wanita, dan anak-anak Timor-Leste dalam peran-peran tempur, intelijen, penyiksaan, dan pembunuhan untuk menguasai penduduk. Pada 1980-an, ketika konflik militer besar-besaran bergeser menjadi resistansi bawahan oleh generasi baru pemuda Timor-Leste, militer Indonesia sekali lagi mengupayakan solusi kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Pasukan pembunuh dan paramiliter pada pertengahan 1990-an menjadi pendahulu milisi-milisi yang merajalela setelah dibentuk pada 1998 – 1999. Sejak 1974 sampai 1999, ada suatu pola yang konsisten untuk membangun pasukan paramiliter Timor-Leste bersenjata yang beroperasi dengan dukungan ABRI dan dengan impunitas total.

2. Strategi militer ini memiliki dampak yang luas dan bersifat jangka panjang bagi rakyat Timor-Leste. Skala kekerasan berlipat ganda, dan bahkan masuk sampai ke desa-desa terkecil di seluruh wilayah. Ketakutan dan kecurigaan menyebar di masyarakat ketika sesama orang Timor-Leste diadu, khususnya dalam operasi-

* Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dikenal dengan ABRI hingga April 1999, ketika polisi dipisahkan dari angkatan lainnya, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, yang kemudian dikenal bersama sebagai Tentara Nasional Indonesia, TNI.

operasi intelijen dan pemantauan. Masalah impunitas dan ketiadaan sistem yang efektif untuk menegakkan supremasi hukum berarti bahwa rakyat Timor-Leste tidak dapat memercayai polisi serta mekanisme pemerintahan sipil untuk melindungi mereka. Pemerintahan sipil benar-benar tunduk pada militer sebagai institusi, dan pada masing-masing komandan yang sangat berkuasa sepanjang masa pendudukan. Banyak pos sipil penting diisi oleh tokoh-tokoh militer atau mantan militer, dari tingkat nasional sampai kabupaten. Hal ini mengebiri kemampuan pemerintahan sipil untuk berjalan dan menerapkan tujuan-tujuan pembangunan nasional.

3. Bab ini memberi latar belakang mengenai sistem militer dan pemerintahan Indonesia sebagaimana yang berlaku di Timor-Leste selama masa pendudukan. Ini menjadi referensi untuk membantu memahami konteks pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan dalam bab-bab lain.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan perannya di Timor-Leste*

Pendahuluan

4. ABRI memainkan peran penting dalam campurtangan dan pendudukan Indonesia di Timor-Leste selama 24 tahun. Pada 1974 – 1975, setelah Revolusi Anyelir di Portugal membuka jalan bagi dekolonisasi di Timor Portugis, BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Nasional) dan pemikir-pemikir sipil dalam Center for Strategic and International Studies atau CSIS, yang berhubungan dekat dengan lembaga tersebut, mendalangi operasi rahasia dan kampanye untuk menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Sejak akhir 1974, kelompok-kelompok ini mulai mempersenjatai dan melatih rakyat Timor-Leste di Timor Barat, dan dengan demikian menyebarkan konflik ke dalam masyarakat Timor-Leste, yang berlanjut hingga 1999.

5. Komisi mendengarkan kesaksian anggota staf senior CSIS, Jusuf Wanandi, yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh militer garis keras mendominasi perdebatan saat Indonesia memutuskan melakukan intervensi militer penuh dan invasi pada 1975. Sejak awal mereka telah menggambarkan intervensi ke Timor-Leste sebagai perang suci antikomunis yang heroik; mengawinkan ide itu dengan ideologi dan sejarah masa lalu rezim Orde Baru untuk mendapatkan dukungan dunia Barat dalam suasana Perang Dingin yang berkelanjutan. Invasi ke Timor-Leste itu merupakan gerakan militer besar-besaran. Tokoh militer garis keras telah meyakinkan pemerintah Indonesia dan para pendukung internasional mereka bahwa pencaplokan Timor-Leste akan menjadi langkah yang cepat dan sederhana. Kredibilitas ABRI dipertaruhkan dalam usaha tersebut. Ketika kemenangan militer ternyata tak secepat dan semudah yang diharapkan, ABRI mencari dan mendapat bantuan militer internasional yang memungkinkannya memperkuat operasinya.¹

* Bagian ini menekankan pada peran militer ABRI yang lazim atau normal. Pembahasan tentang peran sosial politik ABRI dapat dilihat di segmen 4.4 yang membahas tentang pemerintahan sipil.

6. Walaupun ABRI boleh mengaku telah berhasil menanamkan kontrol militer di Timor-Leste sejak akhir 1970-an, ia tak pernah berhasil memadamkan perlawanan bersenjata. Ketika resistansi kemudian mengubah strategi hingga sebagian besar bergantung pada jaringan bawahanah, protes masyarakat perkotaan, serta kampanye diplomasi internasional, ABRI melakukan sejumlah tindakan opresif untuk menghentikan perlawanan tersebut. ABRI membuat kehadirannya di bumi Timor-Leste dapat benar-benar dirasakan baik secara sosial maupun ekonomi. Struktur teritorialnya merambah masuk hingga ke tingkat desa, menyejajari dan mendominasi struktur pemerintahan sipil. ABRI mempertahankan jaringan intelijen di seluruh negeri dan memobilisasi masyarakat sipil Timor-Leste untuk bergabung dalam berbagai macam kekuatan paramiliter selama 24 tahun masa pendudukan, yang berpuncak pada terbentuknya milisi pada 1999. ABRI mempertahankan kendalinya terhadap polisi hingga April 1999. Selain itu, ABRI juga membangun kepentingan dan monopoli bisnis yang sangat kuat di wilayah tersebut, yang, seperti kegiatannya yang lain, telah membawa dampak yang merusak sendi kehidupan sehari-hari masyarakat Timor-Leste (lihat Bab 7.9: Pelanggaran hak ekonomi dan sosial). Invasi ke Timor-Leste dan ketidakmampuan ABRI setelah itu untuk menghancurkan resistansi di wilayah yang didudukinya, membuat wilayah tersebut menjadi ajang bagi para prajurit Indonesia untuk memperoleh pengalaman bertempur dan menumpas pemberontakan selama 24 tahun masa pendudukan. Angkatan demi angkatan perwira menggunakan pengalaman tempur yang diperolehnya di Timor-Leste untuk membangun karier mereka. Beroperasi di provinsi yang teramat jauh, di batas wilayah kepulauan Indonesia, ABRI melaksanakan tugasnya tanpa pengawasan dari pihak luar, dan dalam suatu sistem dengan pemerintahan sipil yang tidak memiliki kekuatan untuk mengimbangi atau mengendalikan tindakan-tindakan militer. ABRI menikmati impunitas penuh atas semua tindakannya.

7. Bab-bab pada Bagian 7 dalam laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia ini akan memerinci segala dampak yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan ABRI terhadap masyarakat Timor-Leste, serta pengalaman masyarakat Timor-Leste hidup di bawah sistem yang didominasi oleh militer Indonesia. Bagian 4 ini berisi informasi tentang ABRI secara umum dan operasi ABRI di Timor-Leste secara khusus, agar seluruh bab yang membahas masalah pelanggaran dapat dipahami sebagaimana mestinya.

Latar belakang ABRI

Latar belakang sejarah ABRI dan TNI²

8. Baik pihak Belanda maupun kemudian pihak Jepang pernah merekrut orang Indonesia dalam angkatan bersenjata mereka. Perwira dalam Tentara Kerajaan Hindia Belanda (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, KNIL) kebanyakan berkebangsaan Belanda, tetapi prajurit biasa adalah orang Indonesia yang dilatih oleh Belanda. Jepang menginvasi pada Maret 1942, dan menjelang akhir tahun itu mereka telah membentuk Heiho sebagai satuan pembantu dengan tugas penjagaan. Pada 3 Oktober 1943, Jepang membentuk pasukan tempur yang lebih formal

bernama PETA (pasukan sukarela Pembela Tanah Air), dengan tugas mendukung Jepang jika pasukan Sekutu mendarat. Pada masa transisi dari kekuasaan Jepang menuju pengakuan Indonesia sebagai negara berdaulat penuh, sejumlah organisasi bersenjata bermunculan. Kelompok-kelompok ini mencerminkan keragaman ideologi di Indonesia, mulai dari Muslim yang memperjuangkan negara Islam, sampai nasionalis radikal serta Komunis yang menginginkan negara sekuler. Pada 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sebagian besar terdiri atas mantan anggota serta perwira PETA. Setelah kedatangan pasukan sekutu pada akhir September 1945, pada 5 Oktober 1945 BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di bawah satu komando pusat. Melalui dekrit Presiden Sukarno tertanggal 26 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat dijadikan Tentara Republik Indonesia (TRI). TRI berhasil dikonsolidasi pada pertengahan Mei 1946, dan pada 26 Juni 1946 baik angkatan udara maupun angkatan laut ditempatkan di bawah komando Panglima TRI Sudirman, alih-alih di bawah Menteri Pertahanan. Pada 5 Mei 1947, Sukarno menggabungkan TRI dengan laskar-laskar bersenjata yang lain untuk membentuk Tentara Nasional Indonesia, TNI. Selama 1950-an panglima-panglima angkatan darat, angkatan udara, maupun angkatan laut berada di bawah komando presiden; tetapi menyusul gejolak politik dan pembunuhan secara luas pada 1965, pada Desember 1965 ketiga angkatan tersebut dikonsolidasi bersama dengan kepolisian hingga menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), di bawah komando Panglima ABRI. Pada April 1999, setelah polisi berpisah dari angkatan bersenjata, ABRI kembali diberi nama TNI.

ABRI sebagai penyelamat bangsa

9. Indonesia telah melalui perjuangan yang panjang dan rumit untuk merebut kemerdekaan dari cengkeraman pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa-masa mengangkat senjata, setelah Perang Dunia Kedua, seluruh masyarakat Indonesia bergerak secara meluas untuk mengusir penjajah Belanda, yang mencoba menanamkan kembali kekuasaannya setelah Jepang menyerah. Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk untuk memimpin perjuangan ini, dan memainkan peran penting dalam memaksa Belanda hengkang dari Indonesia setelah revolusi 1945 – 1949. Selama masa ini, hubungan tentara dengan para politikus dan berbagai laskar rakyat yang bermunculan untuk memperjuangkan apa yang disebut dengan Revolusi tidaklah selalu mulus. Sementara pemimpin sipil Indonesia mengadopsi Undang-Undang Dasar 1950 yang demokratis, pihak militer telah sejak awal merasa memiliki andil besar dalam masa depan perpolitikan Indonesia.

10. Pada tahun-tahun berikutnya, terjadi sejumlah peristiwa penting yang memperkuat kekuasaan militer dan membuatnya dapat mengangkat diri sebagai penyelamat bangsa. Selama 1950-an, TNI telah memerangi berbagai gerakan separatis maupun gerakan-gerakan Islam. Pada 1957 – 1958 Indonesia menghadapi dua pemberontakan kelompok federal; satu di Sumatra (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI), dan satu lagi di Sulawesi (Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta). Kedua pemberontakan ini mendapat dukungan kuat, termasuk dari beberapa elemen militer. Presiden Sukarno menyatakan pemberlakuan darurat militer pada 1957, dan militer, yang ketika itu dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, menghancurkan pemberontakan tersebut. Merasa mendapat angin dari kedua kemenangan tersebut, berikut keberhasilannya mengambilalih perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi pada kurun waktu yang hampir sama, menjelang akhir 1950-an TNI mulai menunjukkan sikap politik yang semakin agresif. Pertama mereka melawan partai-partai politik dan kemudian melawan sistem demokrasi itu sendiri. Pada 1959, dengan dukungan militer, Sukarno membuang demokrasi parlementer. Ia kembali pada UUD 1945 dan memulai apa yang disebut dengan Demokrasi Terpimpin, yang memberi presiden kekuasaan lebih besar. Demokrasi Terpimpin juga memberikan hak kepada militer untuk ikut berpolitik, sebagai salah satu dari yang disebut dengan ‘kelompok fungsional’.³

11. Setelah masa kekacauan pada awal 1960, saat Sukarno memimpin Indonesia yang semakin terpecah-belah, Angkatan Darat, di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto, pada hakikatnya mendongkel presiden dan melancarkan gerakan pembersihan yang penuh kekerasan untuk melawan saingan politiknya yang utama, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan dukungan aktif dari militer, pada 1965 – 1966, antara 250.000 hingga 1 juta orang yang dicurigai sebagai komunis dibunuh dan lebih banyak lagi orang berhaluan kiri dan para pendukung Sukarno ditahan di penjara dan kamp tahanan.⁴ Pada masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto, militer kembali ditampilkan sebagai penyelamat bangsa, kali ini dari ancaman komunisme.

12. Pada 1974, tentara Indonesia mempergunakan ancaman komunisme untuk membenarkan keterlibatannya di dalam operasi rahasia di Timor-Leste (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Pada puncak Perang Dingin, komunisme merupakan simbol yang ampuh untuk menggalang persekutuan dengan negara-negara lain, khususnya karena Amerika Serikat berupaya mengendalikan penyebaran paham komunis di Asia Tenggara. Meskipun tak ada bukti yang menunjukkan bahwa komunisme merupakan kekuatan utama dalam peta perpolitikan di Timor-Leste, atau bahwa negara-negara komunis sedang secara aktif merayu para pemimpin politik Timor-Leste, ABRI menggambarkan kemungkinan Timor-Leste yang merdeka sebagai ancaman terhadap stabilitas Indonesia. Bertahun-tahun setelah invasi yang terjadi pada 1975, ABRI tetap bersikeras bahwa komunislah yang mereka lawan di Timor-Leste.⁵

Doktrin ABRI

13. Doktrin dasar ABRI dikenal dengan nama Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata, yang mengajarkan bahwa seluruh warga negara harus berperan dalam pertahanan nasional. Konsep ini berasal dari pengalaman selama perang kemerdekaan, ketika TNI bergantung pada dukungan rakyat.⁶ Awalnya, konsep ini murni merupakan konsep pertahanan yang berdasarkan pada gagasan bahwa seluruh bangsa perlu melawan musuh yang datang dari luar jika musuh tersebut telah berhasil menaklukkan militer yang ada. Lama-kelamaan, konsep ini berubah karena militer mulai melihat ancaman terhadap keamanan nasional yang terbesar justru datang dari dalam.

14. Peran ABRI dalam kehidupan perpolitikan nasional berubah secara signifikan ketika pada 1959 Presiden Sukarno mendeklarasikan 'Demokrasi Terpimpin' dan memberi Tentara Nasional Indonesia hak untuk ikut serta dalam politik. Di bawah kepemimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution, ABRI membuat kebijakan Dwifungsi ABRI, yang mengakui bahwa ABRI memiliki dua fungsi yaitu fungsi keamanan dan fungsi sosial politik.

15. Sejak 1965 dan munculnya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, ABRI secara eksklusif lebih banyak berkonsentrasi pada keamanan nasional. Hal ini diejawantahkan dalam berbagai kebijakan dan konsep, yang lebih jauh membenarkan keterlibatan ABRI dalam seluruh perikehidupan bangsa. Pada 1966, misalnya, ABRI menganut konsep yang merangkul semua bidang, yaitu Ipoleksos—ideologi, politik, ekonomi, dan sosial.⁷ Penyatuan struktur teritorial, yang menciptakan keberadaan ABRI secara geografis di seluruh wilayah Indonesia (lihat paragraf 17 dan 18), mencerminkan fokusnya untuk menguasai situasi dalam negeri.

16. Selama rezim Orde Baru berkuasa, perbedaan pendapat semakin tidak ditoleransi, hingga pada puncaknya setiap kritik yang ditujukan kepada rezim tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap negara. UU Pertahanan 1982 menyebutkan peran sosial-politik ABRI, yang berbunyi:

Pertahanan dan keamanan nasional mencakup pertahanan melawan ancaman-ancaman baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam, dan ancaman-ancaman ini dapat diarahkan terhadap kedaulatan, persatuan, dan solidaritas nasional, keutuhan bangsa dan hukum nasional, dan nilai-nilai falsafah bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar.⁸

Struktur teritorial ABRI

17. Struktur teritorial militer Indonesia dibagi menjadi dua bidang operasional yang luas, yaitu komando tempur dan komando teritorial. Struktur teritorial merupakan ciri khusus militer Indonesia, yang berawal dari zaman perang kemerdekaan, ketika tentara Indonesia masih terbentuk dari satuan-satuan

nonprofesional yang bersifat lokal, yang melakukan perang gerilya melawan Belanda. Struktur-struktur lokal ini berkembang menjadi struktur teritorial resmi yang ada hingga sekarang, yang menjadi bayang-bayang dan menyejajari struktur pemerintahan sipil. Secara operasional, pada puncak struktur ini terdapat Komando Daerah Militer atau Kodam, yang mengawasi sejumlah Komando Resor Militer atau Korem.* Pada tingkat ini, komando militer tidak selalu berhubungan dengan tingkatan administratif yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi berpenduduk padat—Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur—memiliki Kodam sendiri, dan dalam hal ini Korem di tiga wilayah terakhir itu meliputi sejumlah kabupaten. Tapi, sebagian besar Kodam meliputi lebih daripada satu provinsi sementara Korem meliputi wilayah-wilayah seluas satu provinsi. Inilah yang terjadi di Timor-Leste hampir sepanjang masa pendudukan (lihat paragraf 31 - 33). Di bawah Korem, struktur teritorial selalu sejajar dengan satuan-satuan pemerintahan sipil: setiap kabupaten memiliki satu Komando Distrik Militer atau Kodim dan setiap kecamatan memiliki satu Rayon Militer atau Koramil. Hampir di setiap desa terdapat Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Militer Indonesia juga memiliki angkatan pertahanan sipil yang dikenal dengan nama Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Rakyat Terlatih (Ratih), yang berada di bawah komandonya. Kelompok-kelompok paramiliter ini direkrut dari masyarakat sipil di desa, cara yang murah untuk memperluas kontrol ABRI dan mengerahkan masyarakat umum untuk melakukan tugas-tugas pengamanan (lihat bagian 4.3: Militerisasi masyarakat Timor-Leste, paragraf 64 - 140, di bawah ini). Hasilnya adalah sebuah lembaga yang mampu menanamkan kekuasaan baik pada pemerintah maupun masyarakat di semua lapisan, serta sebarisan besar pasukan tetap yang pada 1993 mampu menugaskan seorang prajurit untuk setiap 900 orang penduduk.⁹

18. Pada tahun-tahun pertama kepemimpinan rezim Orde Baru oleh Presiden Soeharto, struktur teritorial ini dikonsolidasikan dan diperluas. ABRI menjadi tulang punggung rezim itu, dan melalui struktur teritorialnya ABRI mampu menggunakan sejumlah cara untuk memastikan dominasinya. Jaringan musyawarahnya yang terlembaga dan dianggotai oleh para pejabat tingkat tinggi baik dari kalangan sipil maupun kepolisian, yang disebut dengan Musyawarah Pimpinan Daerah atau Muspida, ada di tingkat provinsi dan kabupaten, sementara Tripika (Tiga Pimpinan Kecamatan) di tingkat kecamatan. Di bidang lain, rezim Orde Baru lebih banyak menampilkan wajah sipil pada dunia. Misalnya, Orde Baru mendorong rakyat bersumpah setia kepada negara dengan cara memastikan keikutsertaan mereka dalam aspek-aspek seremonial nasionalisme Indonesia. ABRI juga menerapkan proyek-proyek kerja publik seperti program 'ABRI Masuk Desa', sesuai dengan peran dwifungsi ABRI.

* Hingga 1985, kelompok-kelompok Kodam berada di bawah komando satuan teritorial yang lebih tinggi, yaitu Kowilhan (Komando Wilayah Pertahanan). Kowilhan kemudian dihapus karena dianggap melebihi kebutuhan.

ABRI dan Polisi

19. Polisi Republik Indonesia atau Polri secara kelembagaan merupakan bagian militer selama masa Orde Baru. Sejarah panjang pengabdian polisi pada kepemimpinan angkatan darat sangat berpengaruh pada kemandirian polisi, berikut kapasitas mereka untuk menegakkan hukum dan peraturan. Kekebalan hukum yang selama ini dinikmati oleh angkatan darat dan mereka yang bekerja untuknya juga merupakan dampak pengabdian tersebut. Polisi memiliki doktrin yang serupa dengan ABRI; didirikan atas dasar keyakinan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab seluruh rakyat. Di bawah Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling, anggota masyarakat berperan untuk menjaga keamanan wilayah mereka.¹⁰ Seperti tentara, polisi juga memiliki struktur wilayah, termasuk di tingkat desa (Bintara Polisi Daerah, Binpolda). Selain menjalankan tugas-tugas kepolisian yang normal, polisi juga memiliki satuan bersenjata khusus yang disebut Brigade Mobil atau Brimob. Awalnya, Brimob bertanggung jawab atas keamanan internal, dan karena peran ini telah diambilalih oleh tentara selama masa Orde Baru, Brimob kemudian dikhususkan untuk mengendalikan kerusuhan dan banyak digunakan untuk tujuan ini.

Pendanaan ABRI dan perannya dalam perekonomian Indonesia

20. Sejak terbentuknya, ABRI telah memainkan peran dalam perekonomian Indonesia, yang umumnya disebabkan oleh alokasi dana yang tak memadai untuk angkatan bersenjata,¹¹ dan sebagai akibatnya ABRI terpaksa mengumpulkan dana sendiri.¹² Praktik 'Pendanaan Non-Budgeter' ini akhirnya menjadi berurat-berakar secara kelembagaan.¹³

21. Proses ini dimulai pada zaman Revolusi, ketika TNI harus melakukan improvisasi untuk menyediakan kebutuhan prajuritnya serta kebutuhan negara yang sedang berjuang. Tapi, keterlibatan mendalam mereka di bidang perekonomian baru dimulai pada akhir 1950-an, ketika tentara mengambil peran sentral dalam semua aspek kehidupan bernegara. Nasionalisasi yang terjadi pada 1957 memberikan kepada tentara kontrol atas sejumlah aset negara, yang digunakannya untuk kepentingan lembaga dan perorangan. Para prajurit ABRI juga menduduki posisi kuat di lembaga-lembaga penting milik negara, seperti Badan Urusan Logistik atau Bulog, yang bertanggung jawab atas pembagian bahan makanan pokok.¹⁴ Ini merupakan awal dari peran terlembaga ABRI sebagai kekuatan ekonomi yang besar dalam negara.

22. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto mengurangi alokasi anggaran untuk militer dari hampir 30 persen menjadi kurang dari 10 persen dari APBN.¹⁵ Ia menuai pujian atas apa yang tampak seperti pengurangan peran militer dalam masyarakat. Namun, pada saat yang sama ABRI telah menjadi lebih besar, baik dalam hal ukuran maupun jangkauan wilayah. ABRI juga telah mengembangkan perannya dalam berbagai urusan negara. Kekurangan dalam hal pendanaan dari pemerintah dapat ditutup oleh berbagai bisnis yang dikembangkan ABRI.¹⁶

23. Tujuan pembangunan rezim Orde Baru membenarkan peran ekonomi ABRI.¹⁷ Konsep 'kekaryaan' (saat anggota militer diberi jabatan sipil di berbagai instansi dan perusahaan negara) membenarkan peran ABRI dalam perekonomian negara.¹⁸ Ini berkaitan erat dengan konsep militer penting lainnya, yaitu 'pembinaan', suatu gagasan bahwa disiplin dan ketaatan militer adalah vital untuk kemajuan seluruh bangsa. Untuk melakukan koordinasi atas fungsi-fungsi tersebut, ABRI membentuk kantor pusat masalah sosial politik (Kasospol).¹⁹ Hasilnya adalah sejumlah besar perwira yang hanya mengurus hal sipil, yang pada 1992 telah berjumlah 14.000 orang (lihat segmen 4.4 mengenai pemerintahan sipil, paragraf 141 - 183 di bawah ini).²⁰

24. Kontrol ABRI terhadap aset-aset negara membuatnya dapat memastikan agar kontrak-kontrak yang menguntungkan diberikan kepada bisnis yang terkait dengan ABRI. Hal ini sering menyebabkan terjadinya operasi yang tidak efisien pada lembaga-lembaga negara demi kepentingan ABRI. Contoh paling nyata adalah Pertamina, konglomerat minyak milik negara yang hampir bangkrut pada pertengahan 1970-an, setelah terjadi penumpukan utang besar-besaran dan menjadi "negara dalam negara", yang hanya bertanggung jawab kepada Presiden Soeharto.²¹ Krisis di Pertamina terjadi bertepatan dengan persiapan menuju intervensi di Timor-Leste dan, untuk beberapa saat, krisis itu sempat membuat TNI ragu mengenai kelayakan untuk melancarkan invasi penuh di wilayah tersebut.²²

25. Selain memiliki peran formal dalam birokrasi dan perusahaan milik negara, para perwira ABRI juga beroperasi dalam berbagai kapasitas di luar batasan hukum yang berlaku. Mereka dapat menggunakan posisi mereka sebagai perantara untuk para pengusaha yang mau membayar demi mendapat jalur istimewa. Banyak pengusaha itu adalah orang Indonesia keturunan Cina yang menyiapkan modal dan kemampuan pengelolaan keuangan, sementara perwira ABRI menyediakan pengaruh politis dan, bila perlu, kekuatan militer.²³ Salah satu anggota kelompok ini yang banyak dikenal adalah Liem Sioe Liong, teman dekat Soeharto sejak Orde Baru belum berkuasa. Banyak investor asing yang masuk melalui hubungan serupa.²⁴ Misalnya, PT Freeport McMoran, sebuah tambang emas dan tembaga di Papua Barat. Di sana, ABRI dikontrak untuk memberikan jasa pengamanan sebagai bagian dari transaksinya dengan perusahaan tambang tersebut.*

* Tulisan di *Jakarta Post*, 13 Maret 2003, menyebut bahwa Freeport-McMoran Copper and Gold Inc. telah mengirim "dokumen rahasia kepada kantor pengawas pemerintah di New York serta kepada US Security and Exchange Commission, yang mengungkapkan bahwa pada 2001 perusahaan tersebut telah membayar USD4,7 juta untuk mempekerjakan sekitar 2.300 pegawai keamanan pemerintah Indonesia." *The Australian Herald* (tulisan Sian Powell) pada 15 Maret 2003 melaporkan, Freeport mengungkapkan telah melakukan pembayaran sebesar USD11 juta kepada TNI selama dua tahun terakhir. Freeport menyatakan bahwa "Tambang Grasberg telah dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu kepentingan nasional yang vital. Pernyataan ini berarti bahwa militer memainkan peran penting untuk mengamankan wilayah kerja perusahaan." Pernyataan Freeport menerangkan bahwa ia telah membayar ongkos "pengamanan yang berkaitan dengan pemerintah" untuk operasi tambang ini sebesar USD5,8 juta pada 2001 dan USD5,6 juta pada 2002 (lihat <http://www.minesandcommunities.org/Action/press127.htm>).

Reorganisasi ABRI pada masa Orde Baru

26. Pada zaman Soekarno, keempat angkatan bersenjata (angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan polisi) bersaing satu sama lain, dan para pemimpin staf gabungan ketika itu tidak mampu melakukan koordinasi tugas-tugas pengamanan.²⁵ Pada akhir dekade 1950-an dan 1960-an, penyatuan dan pemusatan yang lebih besar dapat dicapai, dan pada 1967, Presiden Soeharto dengan Orde Barunya menempatkan tugas-tugas militer di bawah komando sebuah kementerian, yaitu Departemen Pertahanan dan Keamanan atau Dephankam.²⁶ Sejak 1967 hingga akhir kekuasaan Orde Baru, Panglima ABRI atau Pangab selalu dipegang oleh seorang jenderal angkatan darat. Kewenangan operasional dialihkan dari kepala staf setiap angkatan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, yang cenderung dirangkap oleh Pangab. Perubahan-perubahan ini menegaskan dominasi angkatan darat secara *de facto* di atas ABRI.

27. Di bawah kepemimpinan Soeharto, sektor intelijen ABRI berkembang menjadi posisi yang memiliki kekuatan sangat besar dalam militer. Intelijen menjadi salah satu aspek inti operasi keamanan internal, yang juga mencakup operasi wilayah, operasi tempur, serta hukum dan ketertiban.²⁷ Pembungkaman terhadap setiap perbedaan pendapat di dalam negeri merupakan fungsi utama angkatan bersenjata. Ketika dipadukan dengan struktur komando terpusat yang baru, sektor intelijen yang semakin berkembang ini membawa dampak signifikan kepada kebijakan dan sikap ABRI.

28. Presiden Soeharto mulai berkuasa pada masa-masa yang bergolak, dan salah satu dari struktur pertama yang ia bentuk untuk melindungi posisinya adalah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib. Ia memiliki kendali langsung terhadap lembaga yang berada di luar konstitusi dan sangat kuat ini.²⁸ Lembaga ini sangat antikomunis dan misinya adalah:

Memulihkan keamanan dan ketertiban sebagai akibat pemberontakan G30S/PKI serta kegiatan-kegiatan ekstremis dan subversif lainnya.²⁹

29. Pada 1966, BPI atau Badan Pusat Intelijen diganti namanya menjadi Koordinasi Intelijen Nasional atau KIN dan dibawah Presiden Soeharto melalui Kopkamtib. Sebuah lembaga lebih informal yang memainkan peran penting pada masa awal pemerintahan Orde Baru di Indonesia adalah Satuan Operasi Khusus atau Opsus yang dipimpin oleh Jenderal Ali Moertopo. Badan ini membantu mengatur Pemilu 1971, dan secara rahasia menjawab berbagai tantangan, seperti mengakhiri “Konfrontasi” dengan Malaysia, dan merekayasa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua Barat pada 1969.³⁰ Pada 1974, Opsus erat dikaitkan dengan *think-tank* sipil, Centre for International Strategic Studies atau CSIS, saat membangun strategi yang berujung pada pengambilalihan Timor-Leste (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

30. Pada 1974, setelah kerusuhan besar yang dikenal dengan Malari, yang menyingkap adanya ketidakpuasan yang meluas pada Orde Baru serta terjadinya perpecahan yang serius dalam tubuh militer sendiri, Soeharto melakukan konsolidasi

dan pemusatan aparat intelijen dan keamanan dalam negeri. Kekuatan yang besar dipusatkan pada Mayor Jenderal Benny Moerdani yang mengepalai bagian intelijen di Departemen Pertahanan dan Keamanan, sekaligus menjabat sebagai wakil kepala Badan Koordinasi Intelijen dan kepala Pusat Intelijen Strategis. Sistem pemeriksaan dan keseimbangan militer dan politik yang biasanya mengendalikan badan intelijen dihapuskan, dan intelijen memperoleh kekuatan dan pengaruh dalam tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jenderal Moertopo serta Moerdani, dengan jaringan intelijen mereka, memainkan peran kunci dalam pengembangan dan penerapan kebijakan di Timor-Leste pada 1974 – 1975.

Struktur organisasi ABRI di Timor-Leste

31. Pada subbagian ini akan dijelaskan tentang struktur komando ABRI selama 25 tahun masa intervensi, invasi, dan pendudukan Indonesia di Timor-Leste. Di sini akan ditelusuri bagaimana ABRI berusaha menyamakan struktur organisasinya di Timor-Leste dengan struktur organisasinya di Indonesia, sambil harus menghadapi kenyataan bahwa sifat konflik yang ada memaksa ABRI memperlakukan Timor-Leste sebagai kasus yang khusus dan pelik selama berlangsungnya masa pendudukan.

32. Selama 24 tahun masa pendudukan, sejumlah pergantian struktur dan kebijakan dilakukan dalam pengaturan militer Indonesia di Timor-Leste. Perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh sifat konflik di Timor-Leste sendiri, oleh bantuan internasional, dan kadang-kadang oleh perhatian internasional, dan akhirnya oleh tekanan internasional agar Indonesia meninggalkan wilayah tersebut. Tahap-tahap keterlibatan militer Indonesia di Timor-Leste adalah sebagai berikut:

- Operasi intelijen rahasia pada 1974 dalam rangka persiapan untuk melakukan tindakan pengambilalihan militer dan pendudukan secara penuh;
- Pembentukan struktur komando militer di Timor-Leste untuk yang diistilahkan sebagai masa transisi, yang berlangsung hingga akhir dekade 1970-an, ketika ABRI berupaya melakukan konsolidasi dan menghancurkan perlawanan bersenjata;
- Pengalihan komando ke struktur komando regional konvensional ketika ABRI menyatakan Timor-Leste telah “aman”;
- Perluasan struktur teritorial ABRI setelah 1979, untuk mengendalikan masyarakat sipil ketika mereka turun dari gunung-gunung dan ditempatkan di berbagai kamp dan desa;
- Pembentukan dua struktur komando secara sejajar, yaitu komando tempur dan komando teritorial, pada dekade 1980-an;
- Keputusan untuk memperlakukan Timor-Leste sebagai provinsi yang “normal” setelah Indonesia membuka sebagian Timor-Leste pada akhir 1988;
- Pergeseran fokus menuju operasi intelijen dan penggunaan Brimob untuk mencegah penyebaran kegiatan bawahan dan demonstrasi masyarakat pada dekade 1990;

- Pengerahan pasukan Kostrad pada akhir 1998 saat terbentuknya milisi;
- Pembentukan struktur komando khusus setelah Jajak Pendapat (30 Agustus 1999), ketika Presiden Habibie menyatakan diberlakukannya darurat militer di Timor-Leste,
- Pencabutan kembali struktur komando khusus pada akhir September 1999, yang kemudian diganti dengan Satuan Tugas Gabungan Timor Timur untuk melakukan koordinasi pengunduran diri Indonesia seiring dengan kedatangan Interfet (International Force for East Timor).

33. Uraian ini merupakan latar belakang untuk bab-bab pelanggaran hak asasi manusia pada Bagian 7 dalam laporan ini, dan untuk Bagian 8: Tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Uraian ini tidak dimaksudkan untuk memberi analisis menyeluruh dari semua faktor yang berperan dalam pergantian struktur organisasi dan kebijakan ABRI, atau segala dampak yang ditimbulkan oleh pergantian tersebut. Sebaliknya, uraian ini menyoroti berbagai perkembangan penting yang relevan dengan hal-hal yang menjadi pusat perhatian Komisi.

Tabel 1: Struktur komando militer di Timor-Leste

| Tanggal | Komando | Operasi besar yang diketahui |
|-----------------|--|--|
| Akhir 1974 | Operasi Khusus (Opsus) ³¹ | Operasi Komodo |
| Awal 1975 | Asisten I/ Intelijen, Departemen Pertahanan dan Keamanan, didukung oleh pasukan khusus Kopassandha ³² | Operasi Flamboyan |
| 31 Agustus 1975 | Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja Gabungan (Kogasgab Seroja). ³³ | Operasi Flamboyan Operasi Seroja (invasi) |
| Agustus 1976 | Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan Timor Timur (Kodahankam) | Operasi Seroja |
| Oktober 1978 | Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja (Kogasgab Seroja) | Operasi Seroja Operasi <i>Skylight</i> |

| | | |
|------------------|---|--|
| 26 Maret 1979 | Komando Regional Militer 164/Wira Dharma (Korem 164) | Operasi Keamanan Operasi Kikis Operasi Persatuan |
| 1984 | Komando Operasi Keamanan Timor (Koopskam Timor Timur). (Komando Perang dan intelijen) | Operasi Watumisa 1 Operasi Watumisa 2 |
| Mei 1990 | Komando Pelaksanaan Operasi Timor Timur (Kolakops Timor Timur). | |
| Maret 1993 | Komando Resort Militer 164 (Korem 164) | Tidak ada operasi formal yang dilakukan, meskipun pasukan perang ditempatkan secara permanen di Timor-Leste. |
| 7 September 1999 | Komando Penguasa Darurat Militer Timor Timur | |
| 23 Sep 1999 | Satuan Tugas Indonesia di Timor Timur | |

Sumber: CAVR

Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja,³⁴ Agustus 1975 – Agustus 1976

34. Keterlibatan militer Indonesia di Timor-Leste dimulai pada pertengahan 1974, ketika Satuan Operasi Khusus (Opsus) di bawah pimpinan Mayor Jenderal Ali Moertopo mulai melaksanakan operasi rahasia yang disebut dengan Operasi Komodo. Pada awal 1975, Operasi Komodo berakhir dan diganti dengan Operasi Flamboyan, di bawah kendali Mayor Jenderal Benny Moerdani, kepala intelijen di Departemen Pertahanan dan Keamanan. Operasi tersebut mendapat dukungan sumberdaya yang lebih baik, dan melibatkan satuan pasukan khusus (Kopassandha), serta melakukan aktivitas yang lebih luas daripada Operasi Komodo, termasuk menciptakan ketidakstabilan, mengumpulkan data intelijen, dan melatih anggota kelompok paramiliter yang direkrut dari masyarakat Timor-Leste. Pada 31 Agustus

1975, Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Panggabean, membentuk Komando Satuan Tugas Gabungan Operasi Seroja (Kogasgab Seroja).³⁵ Dengan demikian, keterlibatan militer Indonesia di Timor-Leste ditempatkan langsung di bawah arahan dan kendali komando pusat ABRI.

35. Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja dipimpin oleh Brigadir Jenderal Soeweno, yang mengomandoi invasi penuh pada Desember 1975, yang dikenal dengan nama Operasi Seroja. Operasi ini merupakan operasi militer gabungan yang melibatkan pasukan dari seluruh angkatan, termasuk yang berikut:

- Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad;
- Komando Pasukan Sandhi Yudha, Kopassandha;
- Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat, milik angkatan udara;
- Batalion-batalion marinir serta infanteri dari beberapa komando daerah.

36. Meskipun Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja langsung memegang komando atas semua pasukan, operasi tersebut dilaksanakan di bawah perintah Kostrad, mula-mula oleh Komandan Tempur (Kopur) II, kemudian setelah Maret 1976 oleh Komandan Tempur Lintas Udara (Kopur Linud).

37. Pada awal 1976, Komando Seroja membagi Timor-Leste menjadi empat sektor operasi. Sektor A meliputi Dili dan daerah Oecussi; Sektor B meliputi Bobonaro, Covalima, Ermera, dan Liquiçá; Sektor C meliputi Aileu, Ainaro, Manufahi, dan Manatuto; dan Sektor D meliputi Baucau, Viqueque, serta Lautém.^{*} Dengan perkecualian sektor A (Dili), suatu gabungan Resimen Tim Tempur (RTP) ditugaskan mengawasi operasi di setiap sektor. Setiap Resimen Tim Tempur terdiri atas enam sampai delapan batalion teritorial, yang mendukung satuan artileri, kavaleri, dan zeni yang disebut sebagai satuan Bantuan Tempur atau Banpur.

Komando Daerah Militer Timor Timur, Agustus 1976 – Oktober 1978

38. Segera setelah parlemen Indonesia meloloskan undang-undang untuk menyatukan Timor-Leste dengan Republik Indonesia pada Juli 1976, ABRI melakukan reorganisasi struktur komandonya di Timor-Leste untuk menggabungkan apa yang selama ini merupakan operasi eksternal menjadi struktur organisasi militer biasa. Pada 4 Agustus 1976, Kementerian Pertahanan dan Keamanan pada dasarnya membuat operasinya di Timor-Leste menjadi operasi dalam negeri dengan cara membentuk Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan (Kodahankam) Timor Timur. Dokumen-dokumen kementerian menjabarkan peran Kodahankam Timor Timur dalam rangka melakukan konsolidasi posisi militer selama apa yang disebut dengan masa transisi:

* Indonesia menyesuaikan beberapa batas kabupaten (Zumalai dulunya bagian dari Bobonaro/Ainaro dan bukan bagian dari Covalima), juga mengubah beberapa nama di akhir dekade 1970 (Same menjadi Manufahi, Lospalos menjadi Lautém).

Komando Pertahanan Wilayah Timor Timur dibentuk dengan maksud untuk membangun landasan bagi Pembinaan dan Pengembangan Pertahanan dan Keamanan di Timor Timur selama “masa transisi” yang berlangsung sampai pada akhir Repelita Kedua (pada 1979), serta untuk menerapkan Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Nasional.³⁶

39. Perubahan yang terjadi sangat besar:

- Tentara mulai membentuk sistem komando teritorial, terdiri atas Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil). Pada mulanya, Kodim diberi nomor 01 (Dili) sampai dengan 13 (Oecussi). Instruksi pada Februari 1977 tentang organisasi Kodahankam memperhitungkan bahwa delapan dari tigabelas Kodim yang ada akan beroperasi di bawah Korem, sementara lima lainnya akan berdiri sendiri dan melapor langsung pada Kodahankam. Tapi, mengingat Korem 164 baru dibentuk Maret 1979, dalam kenyataan semua Kodim berada di bawah komando dan kendali langsung Kodahankam dan kemudian, sejak Oktober 1978 hingga Maret 1979, di bawah penerus Kodahankam yaitu Kogasgab Seroja.
- Kodahankam membawahi beberapa jenis satuan tempur. Meneruskan praktik yang dilakukan pendahulunya, Kodahankam mengerahkan Resimen Tim Tempur atau RTP di sektor-sektor operasi. Pada akhir 1976 hingga awal 1977, struktur ini meliputi RTP 16 di Sektor B, RTP 13 di Sektor C, dan RTP 15 di Sektor D. Selain itu juga dikerahkan Batalion Tempur Berdiri Sendiri serta Batalion Bantuan Tempur Berdiri Sendiri yang semuanya di luar RTP, yang meliputi pasukan artileri, kavaleri, zeni, dan pasukan khusus lainnya.
- Kodahankam meliputi Satuan Tugas/Badan Pelaksanaan Intelijen yang disingkat Satgas/Balak Intel, atau Satgas Intel saja. Satuan ini memainkan peran penting dalam penindasan di Timor-Leste. Satgas Intel akan terus memainkan peran ini hingga dua dekade berikutnya.
- Polisi militer dikerahkan di Dili dan kota-kota utama lainnya. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Polisi Militer memainkan peran aktif dalam pertumbuhan sistem pusat-pusat penahanan dan berdirinya fasilitas rumah tahanan. CAVR tidak memiliki data yang menunjukkan bahwa Polisi Militer melakukan tindakan disipliner terhadap personel militer selama masa ini.
- Satuan polisi tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan dibentuk pada masa ini, meskipun selama beberapa tahun mereka beroperasi langsung di bawah komando Kodahankam.
- Birokrasi militer juga mengalami perkembangan yang signifikan.*³⁷

* Selain dari staf umum yang telah ada, Komandan Kodahankam Timor Timur juga dilayani oleh sejumlah tenaga spesialis (informasi, keuangan, perkembangan mental, sejarah, hukum, dan psikologi) sejumlah badan pelaksanaan (komunikasi dan elektronik, polisi militer, kesehatan, administrasi personel, logistik komando, dermaga laut, dan lapangan udara), serta sejumlah satuan operasional (Brigif/RTP, satuan tugas intelijen, batalion berdiri sendiri, satuan wilayah, satuan tugas laut dan udara, dll).

40. Selama periode ini, ABRI terlibat dalam operasi militer penuh melawan Fretilin/Falintil, yang memegang kendali di wilayah pedalaman yang cukup luas dan terhadap sejumlah besar masyarakat sipil. Senjata militer internasional, terutama dari AS, memainkan peran penting dalam memberikan kemampuan kepada ABRI untuk menghancurkan markas basis perlawanan Fretilin di gunung dan di hutan, dan untuk mengakhiri fase perlawanan ini.

Komando Tugas Gabungan (Kogasgab) Operasi Seroja, Oktober 1978 – Maret 1979

41. Pada 12 Oktober 1978, didirikan Kogasgab Seroja yang baru.³⁸ Kogasgab Seroja ditempatkan di bawah kendali Kodam XVI/Udayana, yang meliputi Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Timur.³⁹ Sebulan kemudian, kendali operasi terhadap Timor-Leste dialihkan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan, yang ketika itu mengawasi wilayah tersebut, kepada Komando Wilayah Pertahanan atau Kowilhan II, yang meliputi Jawa, Bali, dan seluruh Nusa Tenggara. Semua perubahan tersebut mengisyaratkan pengakuan oleh ABRI bahwa mereka telah memperoleh kemenangan penting atas Fretilin/Falintil, dan bahwa tak lama lagi keadaan akan segera “normal kembali”. Keputusan Menteri mengenai pembentukan komando baru menyatakan:

Dari sejak pembentukannya, dan dalam waktu sesegera mungkin, Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja (akan) menghancurkan sisa-sisa Gerombolan Pengacau Keamanan, untuk mempertahankan dan meningkatkan keamanan di wilayah ini, dan membantu dalam persiapan normalisasi pemerintahan sipil yang berjalan, dengan melaksanakan Operasi Keamanan Dalam Negeri di Provinsi Timor Timur.⁴⁰

42. Brigadir Jenderal Dading Kalbuadi yang telah memimpin Kodahankam sejak 1976, ditunjuk menjadi Komandan Kodam XVI/Udayana, dan karena itu tetap langsung mengomandoi operasi militer di Timor-Leste.

43. Di bawah komando Kolonel Sutarto, Kogasgab Seroja mengawasi tahap akhir Operasi Seroja di Timor-Leste pada akhir 1978 dan awal 1979 (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Dengan jatuhnya basis pertahanan Fretilin yang terakhir di kawasan Gunung Matebian (November 1978), Gunung Kablaki (sekitar Januari 1979), Fatubessi, Ermera (Februari 1979), dan Alas, Manufahi (Maret 1979), ABRI memperoleh kekuasaan formal atas seluruh wilayah Timor-Leste. Kematian Presiden Fretilin, Nicolau Lobato, pada 31 Desember 1978 semakin memberi alasan bagi tentara Indonesia untuk berpikir bahwa pertempuran telah usai. Semua perkembangan ini mengawali reorganisasi lebih lanjut pada struktur organisasi militer di Timor-Leste.

Korem 164/Wira Dharma, 1979 – 1999

44. Dengan dinyatakannya Timor-Leste dalam kondisi aman, ABRI kemudian mengakhiri Operasi Seroja, dan pada 26 Maret 1979, ABRI membentuk Komando Resort Militer 164/Wira Dharma atau Korem 164.⁴¹ Ini merupakan satu dari empat Korem yang berada di bawah Kodam XVI/Udayana, dengan markas besar di Denpasar, Bali. Karena rakyat sipil yang menyerah ditempatkan di kamp-kamp penahanan dan kemudian di desa-desa, struktur teritorial pun diperluas. Babinsa (bintara pembina desa) memperluas jangkauan militer hingga ke tingkat desa. Menjelang 1990, jumlah Babinsa melebihi jumlah keseluruhan desa di Timor-Leste.⁴²

45. Ketika melaksanakan operasi, komandan Korem juga menjabat sebagai komandan Kolakops (Komando Pelaksana Operasi). Jadi, Kolakops hanyalah nama lain dari Korem, meskipun ia memiliki pasukan nonorganik tambahan.⁴³

46. Pada 1979, Menteri Pertahanan dan Keamanan mengeluarkan perintah operasi tempur di Indonesia selama 1979 – 1980. Tujuan operasi tersebut di Timor-Leste dijelaskan di bawah ini:

- a) Penghancuran sisa-sisa kegiatan dan kemampuan perlawanan bersenjata dari Gerakan Pengacau Keamanan agar mereka tidak lagi mempunyai kemampuan strategis, khususnya dalam kaitannya dengan perlawanan politik oleh unsur-unsur Gerakan Pengacau Keamanan di luar negeri.
- b) Penutupan Timor Timur sehingga tidak mungkin bagi gerakan Pengacau Keamanan untuk lolos dari wilayah tersebut atau menyelundupkan bantuan fisik dari luar ke dalam wilayah Timor Timur.
- c) Bantuan program rehabilitasi infrastruktur dan normalisasi kegiatan penduduk.⁴⁴

Komando Operasi Keamanan Timor Timur, 1984 – 1990

47. Pada 1984, ABRI menyusun struktur komando tempur baru yang disebut Komando Operasi Keamanan Timor Timur (Koopskam Timor Timur).⁴⁵ Kostrad mendominasi komando tempur yang baru itu. Komandan Divisi Infanteri I Kostrad (Divif I/Kostrad) memegang posisi pemimpin dan stafnya mengisi berbagai posisi dalam struktur komando perang yang baru itu.

48. Selama periode ini, terdapat hubungan hierarkis antara Korem dan Koopskam, dan Koopskam memegang komando utama. Koopskam bertanggung jawab atas operasi tempur dan intelijen, sedang Korem bertanggung jawab atas urusan teritorial. Kepala Komando Operasi Keamanan adalah seorang brigadir jenderal dan karenanya lebih tinggi dari komandan Korem 164, yang adalah seorang kolonel.

49. Kopassandha dan Kostrad memainkan peran besar dalam pertempuran di Timor-Leste selama periode ini. Para perwira yang ditunjuk menjadi komandan Koopskam selama pertengahan dekade 1980 sekaligus mengabdikan sebagai komandan Divisi Infanteri Kostrad yang bermarkas di Jawa Barat.⁴⁵ Penunjukan ganda ini memudahkan koordinasi antara Kopassandha dan pasukan Divif I/Kostrad yang bermarkas di Jawa Barat.

50. Pada Juli 1988 Divisi Infanteri Kedua Kostrad ditunjuk untuk menggantikan Divisi Infanteri Pertama di bawah struktur Komando Operasi Keamanan untuk Timor Timur. Sebuah buku sejarah militer menunjukkan bahwa pada serahterima tersebut, ABRI menganggap Falintil dalam keadaan lemah, namun mengakui kemampuannya untuk melakukan operasi maupun memengaruhi penduduk setempat.

Sisa-sisa GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan) yang berkeliaran di hutan-hutan Timor Timur, terutama yang terdapat di sektor tengah dan timur, secara fisik berjumlah kurang dari 244 orang. Mereka memiliki sekitar 217 buah senjata, yang terdiri dari berbagai jenis senjata ringan, laras panjang dan pendek.

Mereka adalah bekas pemimpin dan anggota Fretilin dan ideologi mereka berhaluan komunisme, Marxisme dan Leninisme. Mereka masih mampu menunjukkan eksistensi mereka. Melalui berbagai cara, mereka mempengaruhi segelintir orang untuk mendukung sebuah negara merdeka yang terpisah dari Republik Indonesia.⁴⁶

Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) Timor Timur, 1990 – 1993

51. Pada Desember 1988, sebagai tanggapan atas permintaan dari Gubernur Mario Viegas Carrascalão di awal tahun tersebut, Presiden Soeharto menandatangani Surat Keputusan Presiden No. 62/1988, yang memberikan Provinsi Timor Timur “status yang setara” dengan ke-26 provinsi lainnya. SK No. 62 tersebut memberi izin untuk bepergian secara lebih bebas di dalam provinsi, membolehkan warga negara Indonesia dari wilayah lain di Indonesia memasuki Timor-Leste, memberikan izin masuk bagi wisatawan ke Timor-Leste, dan membolehkan wartawan luarnegeri mengunjungi provinsi tersebut (setelah memperoleh persetujuan resmi). Semua ini merupakan upaya memperlihatkan sikap ramah pendudukan militer Indonesia atas wilayah tersebut. Pada 1989, Komandan Korem, Kolonel Rudolf Samuel Warrouw, mengumumkan operasi baru dengan nama Operasi Senyum yang bertujuan mengurangi pembatasan terhadap perjalanan, membebaskan sejumlah tahanan politik, serta membatasi penggunaan penyiksaan selama interogasi.

* Hal ini berlaku pada Brigadir Jenderal Sugito (sekitar 1983 – 1985), Brigadir Jenderal Warsito (1985 – 1987), Brigadir Jenderal H. B. Mantiri (1987 – 1988), dan mungkin Brigadir Jenderal Sutarto (? – 1983).

52. Keputusan untuk memperlakukan Timor-Leste sebagai “provinsi biasa” mengakibatkan perubahan lebih jauh pada struktur militer. Pada Mei 1990, Komando Operasi Keamanan untuk Timor Timur dikembalikan ke Komando Pelaksana Operasi di Timor Timur (Kolakops Timor Timur).⁴⁷ Komandan Korem, Kolonel Rudolf Samuel Warrouw, ditunjuk membawahi Kolakops dan ia dipromosikan menjadi brigadir jenderal menggantikan Brigadir Jenderal Mulyadi, seorang jenderal garis keras.

53. Meski demikian, periode ini terjadi bersamaan dengan bangkitnya pemuda perkotaan dan gerakan Resistansi bawahan dan digunakannya demonstrasi oleh rakyat menentang rezim pemerintah Indonesia (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Pada 12 November 1991, tentara militer Indonesia terfilmkan melakukan pembunuhan massal atas para demonstran yang melakukan aksi damai di permakaman Santa Cruz, Dili (Lihat Bagian 3: Sejarah konflik, dan Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Meski Dewan Kehormatan Militer dibentuk, sejumlah perwira tinggi dipecat dari kedinasan, beberapa perwira menengah dan prajurit dibawa ke mahkamah militer, tidak ada tindakan langsung untuk mengubah struktur militer di Timor-Leste.

Komando Regional Militer 164/Wira Dharma (Korem 164), 1993 – 1999

54. Meskipun dunia internasional mengutuk militer Indonesia setelah pembunuhan massal di Santa Cruz, ABRI yakin bahwa ia telah dapat mengendalikan Resistansi. Dokumen militer pada Agustus 1992 menyebutkan bahwa:

Tindakan represif yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia telah menceraiberaikan sebagian besar jaringan bawah tanah, baik di dalam maupun di luar Timor Timur.⁴⁸

55. Kepercayaan diri militer tersebut makin tinggi dengan ditangkapnya Xanana Gusmão pada 20 November 1992 dan Mauhunu (Antonio Gomes da Costa) pada 3 April 1993.

56. Upaya militer semakin bergeser ke arah pengendalian dan penekanan terhadap perlawanan kelompok pemuda. Upaya ini dipimpin langsung oleh Kopassus (Komando Pasukan Khusus).⁴⁹ Ketika Komando Pelaksana Operasi di Timor Timur (Kolakops) dibubarkan, Satuan Gabungan Intelijen (SGI) dialihkan ke Komando Regional Militer 164 dan namanya diubah menjadi Satuan Tugas Intelijen (Satgas Intel). Bertentangan dengan kebijakan resmi untuk menormalisasi status Timor-Leste dan mengurangi kehadiran militer di sana, pada akhir 1994 Brigadir Jenderal Prabowo Subianto dan Kopassus memulai operasi perang urat syaraf untuk mengintimidasi dan meneror penduduk Timor-Leste, menambah pelatihan militer untuk pegawai negeri dan mahasiswa, serta memperbanyak kelompok paramiliter dan mendirikan organisasi milisi baru.⁵⁰

57. Fokus pada tindakan represif terhadap perlawanan di perkotaan selama dekade 1990-an juga ditandai oleh kehadiran dan penggunaan sejumlah besar satuan polisi anti-huru-hara, Brimob.⁵¹ Di Timor-Leste, rasio antara jumlah satuan Brimob dan jumlah penduduk jauh lebih besar daripada di daerah lain di Indonesia pada saat itu.^{*} Di Timor-Leste, pada Agustus 1998, hampir 7.400 personel Brimob yang terkenal dengan kekejamannya ditempatkan di sana, terbagi dalam satuan teritorial (sebanyak 214 personel) dan satuan-satuan yang dibawa dari luar daerah (7.156). (Lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan.)

Terus hadirnya pasukan tempur

58. Pada Maret 1993, Kolakops dibubarkan dan fungsinya dialihkan ke Korem. Operasi tempur biasanya bukan merupakan tanggung jawab komando teritorial.⁵² Sektor Tempur A dan B di Timor-Leste dialihkan ke Korem 164 dan ABRI terus menempatkan pasukan tempur dalam jumlah besar. Informasi terperinci mengenai penempatan pasukan sejak 1998 didapatkan dari dokumen rahasia militer yang diselundupkan dari Timor-Leste.⁵³ Dokumen-dokumen ini secara jelas menyebutkan banyaknya penempatan pasukan tempur: lima batalion tempur infanteri dan sejumlah kontingen dengan tugas khusus sudah berada di Timor-Leste sejak Agustus 1998. Selain itu, satuan pelatihan Kopassus juga hadir, yang merupakan bukti bahwa Timor-Leste telah digunakan sebagai medan latihan bagi pasukan-pasukan elite ABRI.⁵⁴

59. Selama periode antara saat pembubaran Komando Pelaksanaan Operasi di Timor Timur (pada 1993) dan 1999, ABRI terus menempatkan pasukan Kostrad, Kopassus, serta infanteri dan satuan lainnya dari luar Timor-Leste. Dari 1993 hingga 1997, rata-rata ada enam batalion luar yang ditempatkan di Timor-Leste pada setiap saat. Data Komisi menunjukkan, hanya ada satu batalion Kostrad ditempatkan di Timor-Leste pada setiap saat selama periode tersebut. Pada 1995, ABRI mulai menempatkan pasukan strategis dengan tugas khusus ke Timor-Leste. Kontingen pertama pasukan tempur ini, yang bernama sandi 'Rajawali'[†] ditempatkan di sektor tempur di bawah Korem 164 pada Oktober 1995.⁵⁵ Mereka kebanyakan ditarik dari Kostrad, dan pasukan tersebut biasanya dimutasi setiap 12 bulan. Pada akhir 1998, ditempatkan pasukan dari kelompok intelijen dan antiteror Kopassus. Mereka digandengkan dengan Satgas Intel (yang lebih dikenal dengan sebutan awalnya, SGI). Pada 1998, jumlah keseluruhan batalion luar yang ditempatkan di Timor-Leste meningkat hingga mencapai paling sedikit dua belas batalion.⁵⁶

^{*} Rasio pasukan Brimob terhadap penduduk sipil di Indonesia adalah 1:20.000 (Lowry, hal. 94); di Timor-Leste, jumlah ini berkisar pada 1: 700 (berdasarkan 1.013 unit Brimob pada 1998; dan jumlah penduduk 747.557 pada sensus 1990).

[†] Berbeda dengan Kopassus Rajawali.

Komando Darurat Militer Timor Timur, September 1999

60. Sebagai buntut kekerasan yang terjadi setelah Jajak Pendapat, dan di bawah tekanan internasional yang keras untuk mengizinkan pasukan penjaga perdamaian luar memasuki Timor-Leste, Jenderal Wiranto mengirim surat kepada Presiden B. J. Habibie pada 6 September 1999 mengenai “perkembangan terakhir situasi Timor Timur dan rekomendasi kebijakan untuk penanganannya”.⁵⁷ Wiranto menerangkan bahwa keamanan semakin memburuk, menjadi “brutal dan anarkis dan menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda”. Di antara alasan yang dikutipnya adalah “kekecewaan kelompok prointegrasi yang disebabkan oleh keberpihakan pihak Unamet” selain “kesalahan konsepsi di kelompok prointegrasi yang meyakini bahwa mereka dapat mengubah hasil referendum melalui kekerasan.” Tekanan internasional menyebabkan Presiden B. J. Habibie mengambil tindakan berdasarkan surat tersebut, dengan menandatangani Keppres Nomor 107/1999 yang mengumumkan berlakunya darurat militer di Timor-Leste mulai tengah malam 7 September 1999.

61. Setelah pengumuman darurat militer tersebut, Jenderal Wiranto mengeluarkan Perintah Panglima yang menggariskan pembentukan Komando Penguasa Darurat Militer Timor Timur sejak tengah malam, pada 7 September 1999.⁵⁸ Disebutkan bahwa tujuan utama adalah mengembalikan keamanan di Timor-Leste dalam waktu sesingkat mungkin, memberikan jaminan keamanan sehingga hasil Jajak Pendapat dapat dijalankan, dan mempertahankan kepercayaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, termasuk ABRI dan Polri.

62. Mayor Jenderal Kiki Syahnakri diangkat menjadi panglima darurat militer. Ia dan perwira tinggi lain yang baru diangkat pernah bertugas di Timor-Leste selama dekade 1990-an, dan beberapa di antara mereka pernah memegang posisi komandan menjelang diadakannya Jajak Pendapat. Di antara mereka terdapat sejumlah perwira Kopassus.⁵⁹ Ini artinya sejumlah perwira, yang kebanyakan Kopassus, memegang komando atas pasukan Kostrad selama periode darurat militer tersebut. Wiranto mungkin ingin menempatkan perwira Kopassus pada posisi komando sebagai upaya untuk mengurangi kecemasan terhadap personel Kopassus yang telah memainkan peran utama dalam mengorganisasi milisi dan untuk mencegah berkembangnya ketegangan antarsatuan. Selama periode darurat militer inilah terjadi pelanggaran HAM yang paling hebat sepanjang 1999.

Komando Darurat Militer dibubarkan: Satuan Tugas Indonesia di Timor Timur

63. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara anggota utamanya mengingatkan bahwa Indonesia memiliki waktu yang terbatas untuk membuktikan

.....
* Yang pernah bertugas di Timor Leste adalah Kiki Syahnakri, Amirul Isnaeni, dan Gerhan Lentara, dan yang berasal dari Komando Pasukan Khusus adalah Amirul Isnaeni, mungkin juga Liliek Koeshardinato dan Irwan Kusnadi.

bahwa darurat militer dapat secara efektif menciptakan ketertiban dan keamanan (Lihat Bagian 3: Sejarah konflik, dalam segmen setelah Jajak Pendapat). Ketika nyata bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan, Presiden Habibie tunduk pada tekanan tersebut dan meminta bantuan PBB. Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1264 pada 15 September 1999, dan Interfet dimobilisasi pada 20 September untuk mengembalikan perdamaian dengan wewenang penuh sebagaimana terdapat dalam Bab VII Piagam PBB. Pada 23 September 1999 atau segera sesudahnya, Presiden B.J. Habibie mengakhiri darurat militer di Timor-Leste.⁵⁹ Komando Operasi Darurat Militer di Timor Timur dibubarkan dan dibentuk komando keamanan baru yang diberi nama Satuan Tugas Indonesia di Timor Timur. Satuan tugas ini dikepalai oleh Brigadir Jenderal Polisi J.D. Sitorus, komandan Kolonel Sahala Silalahi, dan wakil komandan Kolonel Suryo Prabowo. Satuan Tugas Indonesia di Timor Timur dibentuk untuk melakukan koordinasi dengan Interfet yang akan mendarat.

Militerisasi masyarakat Timor-Leste*

Pendahuluan

64. Masyarakat Timor-Leste mengalami militerisasi besar-besaran selama pendudukan Indonesia. Sifat militerisasi tersebut beragam dalam hal cakupan dan intensitasnya dalam berbagai periode selama konflik, tapi umumnya cukup merasuk selama 24 tahun pendudukan dan menyisakan dampak mendalam pada kehidupan semua orang Timor-Leste.

65. Tak lama setelah Revolusi Anyelir, 25 April 1974, militer Indonesia meningkatkan perhatian intelijennya kepada Timor-Leste, dengan tujuan mendukung partai prointegrasi Apodeti. Di pengujung 1974, militer Indonesia mulai menjalankan operasi-operasi rahasianya di wilayah tersebut (lihat Bagian 3: Sejarah konflik) dan telah mulai mempersenjatai serta memberi pelatihan militer kepada anggota partai Apodeti di Timor Barat.⁶⁰ Intelijen militer Indonesia merupakan arsitek utama pencaplokan Timor-Leste. Mereka melakukan kampanye diplomasi untuk mempertegas status Indonesia sebagai pihak yang berkepentingan, yang pada akhirnya membuat Indonesia memutuskan menginvasi Timor-Leste pada Oktober 1975.

66. Operasi-operasi intelijen merupakan bagian besar dari operasi militer Indonesia dalam berbagai periode selama konflik. Dimulai dengan operasi-operasi rahasia pada 1974 – 1975, selama tahun-tahun awal pendudukan atas kota-kota utama, sampai kepada penyerahan diri besar-besaran dan pemukiman kembali penduduk sipil pada 1977 – 1978, peranan intelijen sangat menonjol (lihat segmen 4.2

* Bagian ini membahas berbagai jenis pasukan paramiliter yang dikerahkan di Timor-Leste oleh militer Indonesia. Demi kejelasan, istilah 'pasukan pertahanan sipil' digunakan untuk menyebut Hansip, Ratih, Wanra, dan sejenisnya, semuanya adalah orang Timor-Leste yang direkrut oleh angkatan bersenjata Indonesia. Istilah 'paramiliter' digunakan untuk menyebut satuan-satuan pembantu asal Timor-Leste yang dibentuk oleh ABRI selama masa pendudukan, dan istilah 'milisi' digunakan untuk menyebut kelompok-kelompok yang dibentuk dalam masa menjelang Jajak Pendapat 1999. 'Pasukan pembantu' digunakan untuk menyebut berbagai kelompok ini secara keseluruhan.

mengenai angkatan bersenjata Indonesia dan perannya di Timor-Leste, paragraf 4 – 63, di atas; juga Bagian 3: Sejarah konflik). Setelah penyerahan diri besar-besaran, Resistansi merancang ulang strateginya dengan membangun jaringan klandestin di permukiman penduduk sipil. Intelijen Indonesia menggunakan mata-mata Timor-Leste untuk mencoba menumpas jaringan tersebut. Hal ini telah berdampak mendalam terhadap rasa percaya dan kerekatan sosial komunitas Timor-Leste.

67. Indonesia menginvasi Timor-Leste dengan bantuan pihak-pihak yang mereka sebut 'Partisan', yakni anggota Apodeti, UDT, dan partai-partai lain yang melarikan diri ke Timor Barat mulai pertengahan 1974. Para Partisan ini memberi preseden kepada ABRI untuk menggunakan kakitangan orang Timor-Leste. Selama perang besar-besaran yang berlangsung pada dekade 1970-an, Indonesia membentuk batalion-batalion dan kelompok-kelompok paramiliter Timor-Leste, mengerahkan pasukan pertahanan sipil, dan memaksa laki-laki dewasa dan anak-anak memberi bantuan logistik bagi pasukan-pasukan tempur. Pada awal dekade 1980-an, tentara Indonesia memaksa penduduk sipil dalam jumlah sangat besar untuk berjalan melintasi seluruh pulau guna menyapu bersih pasukan perlawanan yang tersisa (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

68. Struktur negara yang dipaksakan Indonesia terhadap Timor-Leste sudah sangat termiliterisasi. Hal ini bersumber dari keterlibatan ekstensif Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam politik dan ekonomi selama rezim Orde Baru Presiden Soeharto (lihat segmen 4.2 mengenai angkatan bersenjata Indonesia dan perannya di Timor-Leste, paragraf 4 – 63, di atas). Di Timor-Leste, peran ABRI sangatlah besar jika dibandingkan dengan perannya yang biasa dalam Indonesia di zaman Orde Baru. ABRI terlibat langsung dalam pembentukan Provinsi Timor Timur dan setelah itu mendominasi pemerintahannya (lihat segmen 4.4 mengenai pemerintahan sipil, paragraf 141 – 183, di bawah). Selama masa pendudukan Indonesia atas Timor-Leste, provinsi ini merupakan wilayah konflik, yang bervariasi dari perang besar-besaran di tahun-tahun awal, sampai konflik skala kecil sepanjang sebagian besar dekade 1980 dan 1990. Dibanding provinsi lain tempat ABRI juga terlibat konflik, Timor-Leste merupakan kasus ekstrem. Tidak seperti di provinsi-provinsi lain itu, Timor-Leste menjadi bagian dari Indonesia semata-mata melalui invasi, aneksasi, dan pendudukan. Dengan demikian, ia berbeda dari Indonesia pada umumnya dan ABRI harus menggunakan metode yang berbeda untuk menundukkannya.* Selain itu, Timor-Leste juga merupakan wilayah akuisisi eksternal. Karena alasan-alasan inilah Timor-Leste pada hakikatnya berbeda dari Indonesia dan perilaku ABRI di dalam Timor-Leste dengan demikian juga tidak umum. Hal inilah yang menjadi latar belakang militerisasi mendalam di Timor-Leste oleh pemerintah Indonesia.

69. Pada dekade 1990-an, pemuda Timor-Leste menjadi semakin terbuka dalam kemauannya untuk menentang pendudukan Indonesia. Tanggapan utama terhadap hal ini adalah pergeseran dalam strategi militer, dari melancarkan perang

* Komisi mencatat adanya kesamaan dengan daerah konflik lain di Indonesia, seperti di Papua Barat dan Aceh.

melawan Falintil menjadi perang intelijen melawan perlawanan klandestin yang semakin meningkat.

70. Gerakan kependuan, kelompok-kelompok beladiri, dan organisasi pelajar dan mahasiswa di sekolah-sekolah dan universitas dimanfaatkan untuk menerapkan disiplin dan kesetiaan kepada Indonesia di antara pemuda Timor-Leste. Indonesia memberi penekanan khusus pada ideologi nasionalnya (Pancasila) dan pada pengamalan ritual-ritual nasional melalui seremoni bergaya militer dan acara peringatan hari besar nasional.

71. Sementara kegiatan-kegiatan ini mungkin memiliki sifat militeristik yang merasuk perlahan, pembentukan pasukan-pasukan paramiliter dari kalangan pemuda Timor-Leste pada pertengahan dekade 1990 adalah jelas-jelas brutal. Kelompok-kelompok ini, yang dilindungi oleh Kopassus, melakukan kegiatan kejahatan yang terorganisasi pada siang hari dan penghilangan para pendukung kemerdekaan di malam hari. Kelompok-kelompok pemuda ini menjadi pendahulu milisi yang dikembangkan secara kilat oleh ABRI/ TNI pada 1998 – 1999. Seperti pada 1974 – 1975, militer Indonesia kembali menggunakan kakitangan orang Timor-Leste untuk memberi semacam “penyangkalan yang dapat dipercaya” akan perannya dalam kekerasan yang terjadi. Namun, pada 1999 jelaslah bahwa milisi-milisi ini adalah kepanjangan tangan TNI.

Militerisasi Timor-Leste pra-Indonesia

72. Timor-Leste adalah negeri bergunung-gunung yang secara historis terbagi ke dalam kerajaan-kerajaan regional. Sebagian besar raja tradisional (*liurai*) memiliki pasukan-pasukan dari lelaki setempat, yang sewaktu-waktu akan memerangi pasukan *liurai* tetangga.⁶¹ Dalam berurusan dengan *liurai* Timor, Portugal menggunakan strategi adudomba, dan tak jarang menggunakan pasukan bersenjata *liurai* yang “bersahabat” untuk menumpas pembangkangan yang lain (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Pola ini, saat kekuatan luar memanfaatkan para *liurai* sebagai perantara untuk mengangkat pasukan guna membela kepentingan luar tersebut, dapat diulangi oleh Indonesia dalam kegiatan terselubungnya selama pada 1974 – 1975 dan selama tahun-tahun pendudukan sesudahnya.

73. Perang Dunia Kedua mendatangkan pertama-tama pasukan Australia dan Inggris ke Timor Portugis yang netral, dan kemudian pasukan pendudukan Jepang. Banyak rakyat Timor-Leste mengambil risiko besar untuk membantu sejumlah kecil pasukan Australia dalam kegiatan gerilyanya, sementara yang lain berpihak kepada Jepang atau terperangkap di antara dua kekuatan asing yang berseteru. Lebih daripada 40.000 warga sipil Timor dilaporkan meninggal selama masa pendudukan Jepang dan perang ini menyisakan perpecahan yang mendalam.⁶²

74. Ketika Portugal kembali setelah Perang Dunia Kedua, ia mempertahankan kehadiran angkatan bersenjata profesional yang terdiri atas serdadu Portugis dan anggota-anggota yang direkrut dari negeri jajahan Portugal di Afrika. Polisi secara teknis merupakan bagian dari angkatan bersenjata ini. Anggota asal Timor-Leste

juga direkrut ke dalam angkatan bersenjata ini, walau hanya sedikit yang memegang posisi di atas pangkat rendah. Tidak banyak terjadi perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Portugal selama tahun-tahun ini, yang didominasi oleh rezim otoriter Salazar. Polisi rahasia Portugal, PIDE, memantau segala pertanda pembangkangan di kalangan rakyat Timor-Leste, dan memiliki reputasi yang menakutkan.⁶³ Hal ini mencekik kebebasan berpendapat dan kemampuan membentuk asosiasi atau membuka perdebatan politik. Dibandingkan dengan pengalaman kemudian di bawah Indonesia, dampak angkatan bersenjata Portugal terhadap masyarakat tidak terlalu besar.

75. Ketika Gerakan Angkatan Bersenjata (MFA) mengambilalih kekuasaan di Lisabon pada 25 April 1974, partai-partai politik di Timor-Leste dengan cepat terbentuk (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Komisi mendapat kesaksian dari para pemimpin dua partai besar, Fretilin dan UDT, bahwa mereka menggunakan kekuatan dan kekerasan dalam kampanye mereka dan dalam upaya meningkatkan pengaruh di masyarakat.⁶⁴ Ketika UDT mencoba merebut kekuasaan pada 11 Agustus 1975, mereka melakukannya dengan senjata dari pasukan kepolisian. Ketika Fretilin merespons, faktor penentu kemenangannya adalah dukungan dari para anggota Timor-Leste dalam angkatan bersenjata Portugal dan persenjataan mereka. Baik UDT maupun Fretilin membagi-bagikan senjatanya kepada anggota sipil mereka secara serampangan, sehingga meningkatkan kekerasan selama konflik internal.⁶⁵ Walaupun konflik internal tersebut berlangsung relatif singkat, ia memperparah perpecahan yang ada dan menciptakan perpecahan baru yang menorehkan luka pada masyarakat Timor-Leste selama masa pendudukan Indonesia. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh militer Indonesia dalam upayanya menumpas Resistansi, termasuk melalui strateginya memiliterkan masyarakat Timor-Leste.

Militerisasi partai politik Timor-Leste oleh Indonesia sebelum pendudukan

76. Komisi mendengar kesaksian dari Tomas Gonçalves, anak pemimpin Apodeti yang juga *liurai* Atsabe (Ermera), Guilherme Gonçalves, tentang bagaimana militer Indonesia menggunakan strategi mempersenjatai dan melatih pemuda-pemuda anggota partai mulai akhir 1974.⁶⁶ ABRI menamakan kelompok ini Partisan. Pada Oktober 1974, Tomas Gonçalves berkunjung ke Jakarta dan bertemu perwira-perwira senior militer Indonesia. Ini terjadi tak lama setelah Menteri Luar Negeri Adam Malik bertemu dengan Penanggungjawab Urusan Luar Negeri Fretilin, José Ramos-Horta, dan meyakinkannya bahwa Indonesia akan menghormati hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. ABRI mulai membangun strateginya mempersiapkan pasukan pembantu bersenjata asal Timor-Leste ketika Portugal berupaya menjalankan proses dekolonisasi yang teratur.

77. Ketika Tomas Gonçalves kembali pada November 1974, 216 pemuda dari daerah Atsabe dimobilisasi dan dikirim ke Timor Barat, tempat mereka mendapatkan pelatihan militer dasar dan persenjataan dari para agen rahasia ABRI termasuk anggota Kopassandha.⁶⁷ Setidaknya sebagian dari para pemuda ini dipaksa ikut

serta oleh para pemimpin Apodeti.⁶⁸ Tomas Gonçalves menyatakan kepada Unit Kejahatan Berat dukungan PBB di Timor-Leste bagaimana pemuda-pemuda tersebut dimobilisasi:

Saya ditunjuk menjadi panglima Partisan pada 2 Desember 1974. Jadi, ada panglima tertinggi, saya sendiri, kemudian ada dua komandan kompi, delapan komandan peleton, dan 16 komandan regu. Semuanya ada 216 petempur. Saya berada di bawah komando Yunus [Yosfiah, dari Tim Susi, komando Kopassandha yang merupakan bagian dari Operasi Flamboyan].⁶⁹

78. Sekitar 50 anggota Partisan disertakan dalam setiap tim Pasukan Khusus—Susi, Umi, dan Tuti—dan dikerahkan di daerah asal mereka masing-masing.⁷⁰ Setelah Gerakan Bersenjata 11 Agustus 1975 oleh UDT untuk merebut kekuasaan, ABRI bersama anggota-anggota pasukan Partisan ini memulai serangan lintas-batas dari Timor Barat. Ketiga tim ini melakukan penyerbuan lintas-batas lanjutan pada pertengahan September, sekali lagi tanpa banyak membuahkan hasil.⁷¹ Dalam penyerbuan, dilakukan perekrutan paksa pemuda Timor-Leste untuk berperang bersama Partisan,⁷² dan terjadi sejumlah pembunuhan.⁷³

79. Setelah kekalahan dalam Perang Saudara, pasukan bersenjata UDT dan pendukungnya menarik diri ke perbatasan dan di akhir September masuk ke Timor Barat. Menurut pemimpin militer UDT, João Carrascalão, terdapat sekitar 3.000 pasukan UDT yang melintas batas, lebih daripada 500 di antaranya menenteng senjata.⁷⁴ Mereka terserap ke dalam pasukan Partisan. Serangan-serangan lintas-batas ABRI selanjutnya, pada pertengahan Oktober, melibatkan jumlah Partisan yang lebih besar dan mendapat dukungan lebih baik dari artileri angkatan laut, sehingga dapat merebut Batugade dan Balibó (Bobonaro), dan kota-kota perbatasan lainnya.⁷⁵ Menurut Tomas Gonçalves, penyerangan tersebut melibatkan 216 Partisan Apodeti, 450 anggota pasukan Indonesia, dan 350 orang di bawah kendali João Tavares.⁷⁶ Kelompok terakhir ini dikenal dengan nama Halilintar. Halilintar muncul kembali pada 1994 dengan misi menumpas gerakan klandestin yang semakin berkembang di Distrik Bobonaro, dan selanjutnya menjadi salah satu kelompok milisi terdepan sepanjang 1998 – 1999. Selain menyediakan pengetahuan lokal yang berharga mengenai Timor Portugis kepada satuan-satuan komandonya, Partisan menjadi bagian penting dalam strategi “penyangkalan yang dapat dipercaya” dari Operasi Flamboyan. ABRI mengembangkan mitos bahwa tentara Indonesia yang terlibat dalam operasi-operasi ini hanyalah “sukarelawan” yang membantu orang Timor-Leste kembali dan menguasai keadaan tanahnya.⁷⁷ Tapi, Tomas Gonçalves menceritakan kepada Komisi bahwa perencanaan dan kendali operasi dipegang oleh anggota militer Indonesia, dan Partisan Timor-Leste digunakan sebagai pasukan pendukung, pemandu, dan sebagai sumber informasi intelijen.⁷⁸

80. Tampaknya, beberapa Partisan terpilih ikut ambil bagian dalam invasi Dili,⁷⁹ dan yang lainnya terlibat dalam pendaratan di Baucau selang tiga hari kemudian. Setelah invasi, para Partisan ikut-serta dalam serangan-serangan di pedalaman.

Walaupun ABRI umumnya merombak ulang penggunaan pasukan pembantu asal Timor-Leste mereka, beberapa satuan Partisan terus dipertahankan selama masa pendudukan, contohnya sebuah kelompok di Ermera yang pada 1999 berjumlah sekitar 130 orang.⁸⁰

Pembentukan batalion tempur ABRI beranggotakan orang Timor-Leste

81. Pada 1976, ABRI mulai memberi pelatihan militer formal kepada orang Timor-Leste, ketika 60 orang Partisan dikirim ke Jawa. Pada Juni 1977, menyusul 400 orang Timor-Leste tambahan, yang sebagian sebelumnya berdinis sebagai Partisan. Pada 1 Oktober 1977, orang-orang ini lulus dengan pangkat prajurit, dan pada 24 Januari 1978, komandan militer Timor Timur, Kolonel Dading Kalbuadi, secara resmi mendirikan Batalion Infanteri 744/Satya Yudha Bhakti. Batalion baru beranggotakan 460 orang ini dibagi menjadi empat kompi, dengan komando keseluruhan dipegang oleh Mayor Yunus Yosfiah.⁸¹ Di awal 1977, pasukan ini diberi pelatihan 'Raiders' di Tasitolu, sebelah barat pelabuhan udara Dili, dan kemudian dinyatakan siap tempur. Kelompok kedua beranggotakan lebih daripada 500 orang Timor-Leste yang direkrut dan dilatih pada 1978. Mereka menjadi Batalion 745/Sampada Yudha Bhakti, yang diresmikan pada September 1978 di bawah komando Mayor Theo Syafei. Rencana untuk batalion ketiga, Batalion 746, dibatalkan setelah orang-orang yang baru direkrut dianggap tidak layak.⁸²

82. Batalion-batalion tersebut dimaksudkan untuk sepenuhnya beranggotakan orang Timor-Leste. Namun, rencana ini tidak pernah terwujud. Di antara anggota asal Timor-Leste, terdapat anggota pasukan infanteri Indonesia dan pasukan khusus, dan para perwiranya adalah orang Indonesia sampai ke tingkat peleton.⁸³ Kedua batalion menjadi bagian permanen dari struktur Korem di Timor-Leste selama masa pendudukan dan sering digunakan dalam operasi tempur serta tugas-tugas keamanan internal. Mereka mengembangkan reputasi kebrutalan mereka. Tomas Gonçalves, seorang mantan Partisan, menggambarkan Batalion 744 di masa-masa awalnya:

Partisan baru jadi jahat setelah [Batalion] 744 dibentuk oleh Yunus [Yosfiah], dan mereka jadi anggota 744. 744 terdiri dari orang Jawa, Komando, dan macam-macam. Selama Yunus menjadi komandan 744, selalu terjadi pembunuhan di luar hukum, pembantaian...⁸⁴

83. ABRI juga merekrut orang Timor ke dalam struktur teritorial reguler Korem/Kodim/Koramil. Beberapa orang Timor sebelumnya pernah berdinis dengan tentara kolonial Portugis, sementara yang lain adalah mantan Hansip yang direkrut ABRI melalui program Milsas (lihat segmen tentang 'Anggota Militer Triwulan', Milsas, paragraf 100 – 102 di bawah ini). Sampai Juli 1998, terdapat 6.097 orang Timor-Leste yang berdinis untuk ABRI, dan dari jumlah tersebut 5.510 berdinis pada TNI dan 569 di kepolisian. Kemungkinan orang Timor menjadi perwira atau bintang jauh lebih kecil daripada orang Indonesia. Data menunjukkan bahwa pada

Juli 1998 hanya 0,4% dari orang Timor-Leste yang berdinasi di ABRI adalah perwira dan kurang daripada 24% adalah bintang, sementara 76% adalah prajurit. Sementara itu, proporsi untuk 17.834 anggota ABRI asal Indonesia di Timor-Leste ketika itu sangat berbeda: 5,6% perwira, 34,1% bintang, dan hanya 60,4% yang prajurit.⁸⁵

Berbagai kelompok paramiliter awal, 1976 – 1981

84. Sejak awal, angkatan bersenjata Indonesia bertujuan membawa orang Timor ke dalam konflik di Timor-Leste. Mereka mengangkat orang Timor-Leste sebagai anggota angkatan bersenjata dan menggunakan kelompok paramiliter Timor-Leste untuk melaksanakan operasi rahasia. Selama akhir dekade 1970, militer Indonesia mengerahkan orang Timor-Leste secara khusus untuk berperang melawan Fretilin/Falintil. Kelompok-kelompok paramiliter memiliki peran yang berbeda dengan Partisan, yang diperlakukan lebih sebagai pengangkut barang atau personel pendukung tempur ketimbang sebagai pasukan garis depan. Mereka juga berbeda dengan pasukan pertahanan sipil, yang umumnya tidak memainkan peran tempur di garis depan. Kelompok-kelompok paramiliter yang dibentuk akhir dekade 1970 dan pada dekade 1980 umumnya berkaitan erat dengan Kopassandha.

85. Salah satu pasukan paramiliter yang paling awal dibentuk pada September 1976, ketika Mayor Jenderal Benny Moerdani secara pribadi memberi izin kepada kapten Kopassandha, A.M. Hendropriyono, untuk membentuk Peleton Khusus (Tonsus) beranggotakan orang Timor-Leste di Manatuto. Satuan tersebut direkrut dari anggota inti Apodeti di Laclubar (Manatuto), dan dipimpin oleh mantan anggota Falintil João Branco.* Kelompok ini dengan cepat tumbuh melampaui ukuran unit peleton. Tonsus dipersenjatai dengan baik dan menggunakan orang Timor-Leste dalam operasi tempur khusus di sektor tengah.⁸⁶ Tonsus menjadi prakarsa sukses yang memperlakukan orang Timor-Leste secara setara ketimbang sebagai bawahan. Walaupun berhasil, satuan tersebut berakhir pada 1978, dan ABRI kembali ke kebiasaan lamanya memperlakukan orang Timor-Leste sebagai pembantu logistik ketimbang sebagai petempur garis depan.⁸⁷

86. ABRI juga merekrut orang Timor-Leste masuk ke sejumlah kelompok lain selama akhir dekade 1970. Salah satu kelompok yang disebut Tim Nuklir beroperasi di Moro (Lautém), di bawah komando Camat Edmundo da Conceição da Silva.⁸⁸ Para anggota mantan Partisan yang dikenal sebagai sukarelawan militer atau 'Skadam' (Sukarelawan Kodam) terlibat dalam gempuran terhadap Gunung Kablaki pada Juni 1977. Julukan mereka, 'Skadam', tampaknya menunjukkan bahwa mereka resmi diikutsertakan dalam struktur ABRI.⁸⁹

* Tomas Gonçalves (diwawancarai oleh SCU 8 Agustus 2000) menggambarkan bagaimana orang-orang João Branco telah dilatih di Dili. (Profil Komunitas CAVR di Pairara, Moro [Lautém], 28 Maret 2003.)

Paramiliter dekade 1980-an

87. Pada 1979, ABRI membentuk Tim Morok (yang berarti 'ganas') di bawah komando Filomeno Lopes, di Manatuto.⁹⁰ Tim Morok, yang terdiri atas para mantan anggota Apodeti dan UDT, beroperasi di Manatuto selama dekade 1980-an. Tim kedua, yang disebut Tim Asahan, dibentuk pada 1980 oleh seksi intelijen Kodim Manatuto, yang menempatkannya di bawah kepemimpinan Domingos da Silva ('Apai') dan Antonio Douteil Sarmento, tetapi berjalan hanya satu tahun.⁹¹ Pada 1981, pada masa Operasi Keamanan, tim ketiga yang disebut Alap-Alap dibentuk dan digunakan terutama untuk memberi dukungan pada pasukan tempur.⁹²

88. Pada dekade 1980, ABRI mendirikan beberapa kelompok paramiliter yang lebih terlatih baik. Salah satu yang pertama adalah Tim Railakan (yang berarti 'petir') yang dibentuk sekitar 1980 atau 1981, di bawah komando prajurit ABRI, Julião Fraga, orang Timor-Leste dari Baguia (Baucau), dan beroperasi di Baucau.⁹³ Tim Railakan terlibat dalam beberapa tugas, seperti penangkapan, interogasi, dan penyiksaan orang-orang yang dicurigai sebagai anggota klandestin, dan juga ambil bagian dalam operasi menumpas Falintil. Sekitar 1985, kelompok ini diubah namanya menjadi Tim Saka (Satuan Khusus Pusaka). Julião Fraga terus menjadi komandan kelompok yang diubah namanya ini sampai ia terbunuh di Baucau pada 1995. Railakan/Saka kadang terlihat bekerja langsung dengan Kopassus,⁹⁴ dan sering berlaku sebagai perantara bagi Koramil dalam melakukan penangkapan.⁹⁵ Seputar waktu Railakan diubah namanya menjadi Tim Saka pada 1985, kelompok paramiliter bernama Tim Sera dibentuk di Baucau. Tim Sera beroperasi di bawah komando mantan pemimpin Falintil bernama Sera Malik, terutama di daerah Baucau-Vemasse-Venilale. Pasukan paramiliter lainnya dari masa ini adalah Tim Alfa, dibentuk oleh kapten Kopassus, Luhut Panjaitan, di Lautém, mungkin pada sekitar 1986.⁹⁶

89. Kelompok-kelompok paramiliter memiliki beberapa kegunaan, seperti ikut-serta dalam penyerangan dan operasi-operasi. Seorang informan CAVR menceritakan bahwa:

Mayor Sinaga membentuk Tim Lorico di Desa Oestico Loilubo [Vemasse, Baucau] dari para mantan Falintil. Ia menggunakan mereka untuk operasi di hutan, dan setelah mereka menemukan lokasi Falintil, pasukan ABRI akan masuk dan menembak...Setelah Sinaga pergi dari Timor-Leste, anggota Tim Lorico menghilang satu per satu.⁹⁷

90. Kelompok-kelompok paramiliter juga memiliki fungsi yang menunjukkan kedekatannya dengan Kopassus, seperti dalam operasi-operasi rahasia dan sering berlaku sebagai agen-agen intelijen. Tim-tim ini membentuk tradisi kedekatan hubungan antara ABRI, khususnya Kopassus, dengan unit-unit paramiliter Timor-Leste. Pada tingkat pribadi, hubungan tersebut sering terus berlanjut selama tahun-tahun konflik.⁹⁸

Pasukan Pertahanan Sipil

91. Salah satu prinsip dasar ideologi militer Indonesia adalah pengertian Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), di mana seluruh penduduk sipil harus memainkan peran dalam pertahanan nasional.^{*} Menurut pengertian ini, warga sipil Indonesia dapat dipilih untuk menjalani pelatihan militer dasar, hingga kemudian dikenal sebagai Rakyat Terlatih (Ratih). Seleksi lebih lanjut terhadap barisan Ratih ini dapat menghasilkan (a) Pertahanan Sipil (Hansip), yang bertanggung jawab melindungi penduduk sipil pada saat bencana alam atau perang; (b) Keamanan Rakyat (Kamra), yang bertanggung jawab membantu polisi; dan (c) Perlawanan Rakyat (Wanra), yang harus membantu angkatan bersenjata.[†] Meskipun secara teoretis seluruh golongan ini berada di bawah administrasi Departemen Dalam Negeri (Depdagri), di Timor-Leste kelompok-kelompok ini beroperasi langsung di bawah komando dan pengaruh militer Indonesia.⁹⁹

92. Penggunaan penduduk sipil Timor-Leste yang direkrut ke dalam pasukan pertahanan sipil di Timor-Leste selama masa konflik adalah contoh bagaimana ABRI menyesuaikan strategi standarnya dengan kondisi wilayah ini. Di Timor-Leste, ABRI menggunakan pasukan pertahanan sipil dalam peran keamanan teritorial yang biasa, tapi juga dalam peran tempur serta pengintai dan intelijen. Di Indonesia, Departemen Dalam Negeri adalah lembaga yang mengatur pasukan pertahanan sipil, tapi di tahun-tahun awal konflik di Timor-Leste, pasukan Hansip ini beroperasi langsung di bawah komando dan kendali militer Indonesia dan baru di dekade 1980-an tanggung jawab tersebut beralih ke Departemen Dalam Negeri.¹⁰⁰

93. Penggunaan luas pasukan pertahanan sipil warga Timor-Leste berdampak dramatis terhadap kehidupan orang Timor-Leste dengan membawa konflik dan militer ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berbasis di komunitas-komunitas, anggota pasukan pertahanan sipil digunakan sebagai penghubung antara penduduk sipil dan militer. Pengumpulan informasi intelijen adalah kegiatan yang terjadi di mana-mana, dan anggota pasukan pertahanan sipil sering terlibat dalam pelanggaran langsung terhadap penduduk sipil, baik yang dilakukan bersama anggota ABRI maupun sendiri-sendiri. Karena dilindungi oleh ABRI, mereka relatif menikmati impunitas atas tindakannya. Komisi menerima banyak pernyataan dan kesaksian mengenai kekerasan yang dilakukan anggota komunitas yang telah menjadi anggota pasukan keamanan sipil di bawah ABRI (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan; dan Bab 7.7: Pemerksaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual).

.....
^{*} Prinsip ini diperoleh dari strategi gerilya yang digunakan di dalam revolusi Indonesia.

[†] Tinjauan umum sistem ini dapat dibaca dalam dokumen rahasia Korem 164 Wira Dharma, Seksi Intel, "Rencana Penyusunan Kembali Rakyat Terlatih," ditandatangani oleh Mayor Willem da Costa, tertanggal 10 September, 1982, hal. 2; dan Robert Lowry, *The Armed Forces of Indonesia* (St. Leonards, NSW: Allen and Unwin, 1996), hal. 111.

94. Satuan-satuan Hansip Timor-Leste pertama dibentuk pada paruh kedua 1976, tidak lama setelah pernyataan integrasi Indonesia pada Juli 1976.¹⁰¹ Sampai pertengahan 1976, terdapat 5.897 anggota Hansip di Timor-Leste; jumlahnya bervariasi di seluruh wilayah, dengan jumlah terbesar di Baucau (700) dan Ainaro (665), dan terkecil di Lautém (187).¹⁰² Anggota Hansip sering digunakan sebagai personel dukungan tempur, peran yang biasanya diisi oleh Wanra di tempat-tempat lain di Indonesia. Di Indonesia, Hansip adalah lembaga mantap yang anggotanya menerima gaji sehingga cenderung bertugas lama, sedangkan anggota Wanra tidak selalu digaji. Namun, perbedaan Hansip dan Wanra di Timor-Leste tidak selalu jelas. Hal ini mungkin saja karena pihak militer sering menggunakan Hansip dalam kapasitas sebagai Wanra, atau mungkin karena suatu waktu antara 1978 dan 1980 Hansip diklasifikasi ulang sebagai Wanra. Keduanya memainkan peran yang pada hakikatnya sama. Sampai 1980, jumlah orang yang ketika itu resmi disebut Wanra mencapai 6.500, tetapi dua tahun kemudian, jumlah tersebut menurun jadi 4.800.¹⁰³

95. Pasukan Rakyat Terlatih (Ratih) pertama kali dibentuk di Timor-Leste pada 1981, untuk membantu Operasi Keamanan. Pada tahun berikutnya, terdapat 6.000 orang Ratih.¹⁰⁴ Ekspansi yang demikian pesat ini bersamaan waktunya dengan adanya rencana untuk mengalihutugaskan Hansip/Wanra menjadi Ratih, terutama untuk menghemat biaya. Pasukan Keamanan Rakyat (Kamra) dibentuk oleh polisi Indonesia pada awal 1981, dan jumlahnya mencapai 1.690 pada 1982.¹⁰⁵ Secara keseluruhan, sampai 1982 terdapat hampir 12.500 orang Timor-Leste yang terlibat dalam berbagai organisasi pertahanan sipil. Walaupun sulit membuat pernyataan yang pasti tanpa mengetahui jumlah penduduk di Timor-Leste pada 1982, angka ini adalah kurang-lebih 2,25% dari keseluruhan jumlah penduduk.* Secara nasional angka ini adalah sekitar 2%.[†]

96. Selama 1981 – 1982 komando militer di Timor-Leste menurunkan status banyak Hansip menjadi Ratih. Pada waktu itu, ABRI menyatakan tujuannya untuk:

[M]embentuk kesadaran di antara rakyat Timor mengenai perlunya membela negara, menuju pembentukan kesadaran oleh setiap warga bahwa ia memiliki hak dan kewajiban untuk ambil bagian tanpa ragu-ragu dalam bela negara.¹⁰⁶

97. ABRI mengalami kesulitan dalam mengendalikan pasukan pertahanan sipilnya. Pada 1983, sebagian karena diperlakukan tidak baik, dan mungkin sebagai respons atas hilangnya pekerjaan mereka akibat rencana pengurangan anggota pada 1982,¹⁰⁷ banyak anggota Hansip yang membelot ke Falintil.¹⁰⁸

98. Satuan-satuan pertahanan sipil berfungsi dalam suatu struktur militer teritorial yang sudah demikian luas, yang di tingkat desa mencakup Babinsa (Bintara Polisi

* Penghitungan ini didasarkan pada aras perkiraan Biro Pusat Statistik Indonesia bahwa pada 1982 penduduk Timor-Leste berjumlah 555.350.

† Berdasarkan angka 4 juta anggota pasukan pertahanan sipil dalam populasi 200 juta pada 1992. Lihat Lowry, *The Armed Forces of Indonesia*, hal. 112.

Daerah), Binpolda, dan terkadang sebuah peleton dari Batalion 744 atau 745. ABRI melakukan upaya besar untuk merekrut satuan-satuan pertahanan sipil. Beberapa anggota bergabung dengan sukarela; yang lain di bawah paksaan.¹⁰⁹ Anggota-anggota satuan pertahanan sipil secara umum menjalani masa pelatihan yang singkat dari komando teritorial setempat (Kodim atau Koramil), dan setelah dilatih mereka akan menjalani peran bantuan tempur bagi ABRI dan pasukan paramiliternya:

Tugas dan fungsi milisi adalah untuk berpatroli, dan menutup jalan-jalan setapak yang digunakan oleh musuh ketika berpindah (hal ini dapat dilaksanakan sendiri atau bersama dengan Pasukan Marinir 5). Sementara fungsi dan tugas Hansip adalah untuk menjaga pos-pos TNI tertentu (di malam hari), dan untuk berlaku sebagai penunjuk jalan pada saat patroli, atau untuk melakukan kegiatan bantuan tempur bagi milisi.¹¹⁰

99. Dalam sebagian besar kasus, satuan-satuan pertahanan sipil bertindak atas perintah komando militer Indonesia setempat.¹¹¹ Komisi menemukan bahwa pasukan pertahanan sipil disinyalir terlibat dalam banyak pelanggaran selama operasi-operasi militer.'

'Anggota militer triwulan', Milsas, 1989 – 1992

100. Tampaknya setelah mengambilalih kendali Hansip dari ABRI pada awal dekade 1980, pada 1989 Departemen Dalam Negeri tidak ingin memberi dukungan sumber anggaran secukupnya untuk mempertahankan Hansip dan kelompok cadangan yang dikenal sebagai Perlindungan Masyarakat (Linmas), yang dilatih untuk penanggulangan bencana dan situasi darurat. Ketika itu, secara nasional ABRI tengah kesulitan untuk memenuhi rencana kuotanya untuk menjadikan 3,5% dari seluruh penduduk nasional sebagai anggota pertahanan sipil.¹¹² Karena keanggotaan satuan-satuan pertahanan sipil di Timor-Leste melampaui rata-rata nasional, penghematan dana barangkali adalah alasan yang kuat untuk pengurangan ini.¹¹³ Akibatnya, Departemen Dalam Negeri memutuskan untuk mengalihkan banyak anggota Hansip ke dalam militer. Program ini disebut 'Milsas', singkatan dari militerisasi, atau dikenal juga sebagai 'anggota militer triwulan'. Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia mencatat bahwa:

Milsas—yang oleh pejabat militer senior di Jakarta sering disebut sebagai anak-anak daerah TNI—hanya berfungsi di Timor Timur untuk membantu operasi TNI di Timor Timur.¹¹⁴

.....
* HRVD (basis data pelanggaran hak asasi manusia) milik CAVR mencantumkan 784 tindakan yang dilakukan oleh Hansip pada masa 1975 – 1979. Lihat khususnya Bab 7.7: Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual dan 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan .

101. Pada 1989, ABRI memilih sekitar 1.000 mantan Hansip untuk dikirim ke Malang (Jawa Timur) dan Bali untuk mengikuti program pelatihan tiga bulan. Setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, para mantan Hansip akan menjadi anggota ABRI dan kembali ke Timor-Leste dan sebagian besar ditempatkan di Kodim. Pada 1992, kelompok kedua seribu orang mantan anggota Hansip dipilih dan dikirim ke Jawa dan Bali untuk menjalani pelatihan. José Sales dos Santos menjelaskan:

Saya dimiliterisasi pada gelombang kedua, bersama 1.000 Hansip dari seluruh distrik. [Sebanyak] 700 [orang] dikirim latihan ke Malang dan 300 dikirim ke Bali. Setelah tiga bulan, semuanya kembali bertugas di Kodim masing-masing.¹¹⁵

102. Antara 1989 dan Agustus 1991, program 'milsas' ini menghasilkan pengurangan sebesar 50% atas keseluruhan jumlah Hansip (mencakup Kamra dan Wanra), dari 4.996 menjadi 2.023.¹¹⁶

Tenaga Bantuan Operasi (TBO)

103. ABRI memaksa banyak warga sipil Timor-Leste untuk bekerja sebagai kuli angkut, pemandu jalan, tukang masak, dan bahkan pembantu pribadi tentara, khususnya selama masa operasi intensif dekade 1970-an dan awal dekade 1980-an. Sebuah dokumen militer dari 1982 menyatakan bahwa 60.000 warga Timor-Leste terlibat sebagai personel pendukung.¹¹⁷ Mereka ditempatkan sebagai tenaga bantuan operasi (TBO). Banyak orang direkrut sebagai TBO selama operasi 1981 yang dikenal dengan nama 'pagar betis' (Operasi Kikis) (Lihat Bagian 3: Sejarah konflik, dan Bab 7.3: Pemandangan paksa dan kelaparan). Satu sumber menggambarkan pemaksaan yang digunakan dalam perekrutan:

Pada 1979, Francisco Amaral didatangi oleh tiga orang Hansip dan dibawa ke Uatolari ... ia diinterogasi oleh [pegawai] kecamatan dan Batalion 202 mengenai di mana perlengkapan [Fretilin] disembunyikan, yang ia tidak tahu ... ia dipukuli sampai ia kencing dan berak dan darah keluar dari mulut dan hidungnya. Setelah itu sebuah Kompi Marinir mengambilnya sebagai TBO.¹¹⁸

104. Banyak orang muda diambil sebagai TBO. Mereka diperbantukan pada suatu satuan untuk jangka waktu yang berbeda-beda, terkadang sepanjang operasi berlangsung, walau kadang juga jauh lebih lama. Administrator Apostolik Katolik Dom Martinho da Costa Lopes mencatat bahwa pada waktu itu perekrutan paksa ini menyisakan dampak yang amat buruk bagi warga desa biasa yang diambil dari ladang dan kebunnya pada masa tanam. Sebuah laporan polisi pada 1978 memberi penilaian yang cukup terbuka mengenai konsekuensi sosial perekrutan paksa:

Selama Operasi Gempur di sektor tengah baru-baru ini, orang-orang dipaksa menjadi TBO. Pelaksanaan hal ini menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya di Dili, yang menjadi sepi di

malam hari [karena] para orang tua takut kalau anak-anaknya akan diambil oleh ABRI. Kegiatan pendidikan dan Pramuka di sekolah-sekolah sementara ini agak terganggu.¹¹⁹

105. Bab 7.8 mengenai hak anak memerinci pengalaman anak-anak dan pemuda Timor-Leste yang diambil sebagai TBO oleh militer Indonesia. Banyak dari mereka yang terekspos pada kondisi pertempuran dan dipaksa berjalan kaki sambil membawa peralatan militer yang berat, dan diharuskan tinggal dalam kamp-kamp militer bersama tentara dewasa. Alfredo Alves mengenang pengalamannya ketika ia diambil dari ibunya menjadi TBO pada usia 11 tahun, serta intimidasi dan kekerasan yang dilakukan tentara Indonesia terhadap rekan-rekannya anak-anak Timor-Leste:

Satu hari seorang TBO yang sedang membawa beban berat, menolak membawa lebih banyak lagi beban. Tentara itu jadi marah. Ketika kembali ke kamp, semua tentara di peleton dan TBO dikumpulkan. Komandan berkata bahwa seorang TBO tidak boleh menolak membawa barang. Dia bilang tentara datang untuk membantu dan membawa kemerdekaan. Setelah itu TBO yang tadinya menolak membawa barang tersebut dipanggil dan ditembak di depan semua orang. Mereka bilang bahwa kalau kami menolak untuk patuh, nasib kami akan sama seperti dia.¹²⁰

'Intel'—Mata-mata orang Timor-Leste

106. Selama masa konflik, satuan intelijen menggunakan mata-mata dan informan orang Timor-Leste untuk mengumpulkan informasi. Penggunaan orang Timor-Leste oleh ABRI dalam kapasitas intelijen sudah terjadi sejak sebelum invasi Timor-Leste, ketika ABRI mengandalkan pasukan Partisan untuk menyediakan informasi intelijen setempat dan sebagai pemandu dalam penyusupan awal ke wilayah Timor-Leste. Menurut Tomas Gonçalves, para Partisan diminta memberikan informasi geografis dan politik tentang Timor Portugis:

Di situ, mereka [orang Indonesia] tidak berbicara dengan kami. Mereka sebut kami 'Partisan', dan Partisan tidak bicara dengan mereka... Mereka panggil saya dan bertanya, "Kurang lebih ada berapa banyak senjata yang mereka miliki di Timor? Ada berapa kompi? Di situ apakah banyak orang tahu cara pakai senjata? Mereka tahu bagaimana menjadi pejuang gerilya?"¹²¹

107. Belakangan, ketika penduduk sipil menyerah secara besar-besaran dan ditahan oleh ABRI di kamp-kamp penahanan dan desa-desa pemukiman ulang, prioritas ABRI adalah untuk menjaga agar mereka tidak berhubungan dengan Falintil yang masih ada, sehingga ABRI memerlukan sumber-sumber intelijen untuk mengetahui siapa saja yang dekat dengan pasukan gerilya. Pada akhir 1981 dan Januari

1982, Komandan Korem 164 Kolonel Adolf Sahala Radjagukguk mengeluarkan serangkaian perintah mengenai operasi teritorial dan intelijen, peran Babinsa dan keamanan kota, termasuk wilayah pemukiman ulang.¹²² Perintah-perintah ini menunjukkan bahwa militer menyadari masih adanya perlawanan yang kuat di antara penduduk sipil, dan perlunya mengupayakan pemutusan hubungan dan dukungan kepada Resistansi bersenjata. Untuk mencapai hal ini, berbagai dokumen menetapkan serangkaian tujuan, seperti membangun masyarakat tempat pasukan keamanan akan “bersarang” secara mendalam di tiap-tiap komunitas, memantau dan mengandalkan para informan orang Timor-Leste untuk menciptakan operasi intelijen kuat yang mampu mengendalikan penduduk sipil dan membatasi kontak dengan Falintil. Contohnya sebuah organisasi yang dibentuk di Quelicai:

Pada waktu itu [1981] terdapat organisasi yang disebut ‘Siliman’ [Siguranca Sipil Masyarakat], yang dibentuk oleh TNI-Koramil, dengan tujuan untuk memata-matai. Anggotanya adalah warga Quelicai. Di antara mereka ada [nama-nama disebut]... Organisasi itu sering memantau gerakan deponen dan jika mereka ketahuan akan dilaporkan kepada Koramil.¹²³

108. Pada awal dekade 1980-an, setelah penyerahan diri besar-besaran pada 1978 – 1979, sejumlah besar penduduk Timor-Leste ditempatkan di dalam kamp-kamp pemukiman ulang. Secara struktur, ABRI merancang agar pos-pos pertahanan sipil (Hansip/Wanra) ditempatkan di kota-kota sekitar. Pasukan pertahanan sipil (Hansip/Wanra) diharapkan dapat mengisi peran perantara antara rakyat dengan militer, yang biasanya diwakili oleh seorang Babinsa atau Tim Pembina Desa. Tugas mereka antara lain menjalankan tugas yang diberi oleh militer, serta memantau sesama warga. Untuk mendukung, Ratih akan melakukan pengamanan internal:

Penduduk sipil laki-laki yang dipersenjatai dengan tombak dan parang, dalam keadaan bahaya, akan dikumpulkan di satu tempat di desa mereka (di dalam kota).¹²⁴

109. Hal ini terjadi pada satu masa ketika ABRI bermaksud menggunakan semakin banyak orang Timor-Leste sebagai pasukan pembantu keamanan/pertahanan, untuk mendekati Timor-Leste dengan doktrin ABRI ‘Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta’ (Hankamrata). Sebuah dokumen militer dari Februari 1982 membahas gagasan ini:

Dengan menguatnya keamanan, SATPUR (satuan tempur) akan dikurangi besarnya sementara peran pertahanan sipil (HANSIP-WANKAMRA) akan ditingkatkan dan akan memainkan peran terpenting dalam membela dan mengamankan wilayah mereka dari sisa-sisa GPK dan ekstremis.¹²⁵

* Kehadiran pos Babinsa di setiap desa di Timor-Leste jumlahnya jauh melebihi yang normal di Indonesia, dan mencerminkan tujuan ABRI untuk mengontrol ketat penduduk Timor-Leste.

110. Warga Timor-Leste direkrut untuk bekerja sebagai informan dengan berbagai cara. Beberapa orang sukarela membantu satuan-satuan intelijen, yang lainnya disuap, dan yang lainnya lagi dipaksa atau diancam. Militer sering berupaya “membelotkan” anggota klandestin dan mantan gerilyawan Falintil untuk bekerja bagi Satgas Intel.

111. Menjelang akhir dekade 1980-an, ketika Resistansi membangun gerakan klandestin di kota-kota, ABRI membutuhkan kemampuan intelijen lokal yang kuat agar dapat mengendalikan jaringan klandestin yang sedang bertumbuh ini. Mulai saat itu, strategi ABRI bergeser dari fokus terhadap perlawanan gerilya kepada upaya untuk membongkar Resistansi klandestin. Setiap unit teritorial (seperti Korem, Kodim, Koramil) memiliki personel intelijen dan masing-masing merekrut jaringan informannya sendiri. Unit intelijen yang memiliki reputasi paling menakutkan adalah Satuan Tugas Intelijen (SGI).^{*} Satuan ini pertama kali dibentuk di bawah Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan (Kodahankam) pada 1976 dan belakangan dialihkan kepada struktur-struktur komando penerus.[†] ¹²⁶ Secara resmi SGI berada di bawah kendali Korem, sampai pada pertengahan dekade 1990 Kopassus memiliki kendali yang luas atas SGI.¹²⁷

112. Orang Timor-Leste menyebut para informan intelijen dan mata-mata sebagai *Mauhu*; ‘Mau’ berarti nama laki-laki dan ‘hu’ berarti ‘meniuip’. Sistem informan intelijen dan mata-mata ini memainkan peran penting dalam menciptakan kecurigaan di antara orang Timor-Leste. Ini memungkinkan militer untuk menyusup ke dalam Resistansi, serta menyebarkan desas-desus dan disinformasi. Banyak orang Timor-Leste terpaksa memainkan peran berbahaya sebagai agen ganda, dan selalu berada dalam bahaya dicurigai oleh kedua pihak. Ada banyak mata-mata Timor-Leste, dan kehadiran mereka yang luas berarti bahwa warga sipil jarang tahu siapa yang sebenarnya ‘Mauhu’ dan siapa yang bukan, siapa yang harus dihindari dan siapa yang harus dipercaya. Meluas dan masuknya sistem ini menabur kecurigaan mendalam di kalangan penduduk Timor Timur, dan kerekatan sosial menjadi korban dari elemen terselubung dalam konflik ini.

Dekade 1990 dan perhatian pada pemuda

113. Di akhir dekade 1980-an, para pemuda Timor-Leste muncul sebagai unsur penting baru dalam gerakan resistansi klandestin kota. Hal ini menimbulkan kerisauan rezim Indonesia yang telah berharap besar pada generasi baru Timor-Leste yang dididik dalam sistem Indonesia.

114. Di akhir dekade 1970 dan awal dekade 1980, polisi Indonesia, yang ketika itu adalah bagian resmi militer, mendorong tumbuhnya gerakan kepanduan Indonesia

.....
^{*} Lihat paragraf 56 dan 59. Militer biasanya menyingkat ‘Satuan Tugas Intelijen’ menjadi ‘Satgas Intel’, tapi terdapat juga dokumen-dokumen militer dari 1992–1993, saat ia disingkat sebagai SGI. Sebagian besar orang Timor Leste mengenal unit ini dengan nama SGI.

[†] Pada 1978, Satgas ditransfer ke Kogasgab Seroja; pada 1979, Satgas ini ditransfer ke Korem 164; pada 1984, ke Komando Operasi Keamanan; dan pada 1990, ke Kolakops.

(Pramuka) sebagai cara untuk menanamkan disiplin nasional di antara anak-anak muda Timor-Leste. Program ini mencakup pelatihan gaya militer seperti baris-berbaris, membantu Palang Merah Indonesia, dan menghadiri upacara-upacara resmi. Sampai Mei 1978, terdapat hampir 10.000 anggota, yang meningkat menjadi 22.455 pada 1981.¹²⁸ Kelompok-kelompok beladiri pemuda juga dibentuk dan didorong perkembangannya. Melalui pelatihan fisik umum dan dengan mengenakan seragam, kelompok-kelompok ini meniru perilaku tentara.

115. Mahasiswa Timor-Leste juga dijadikan sasaran oleh angkatan bersenjata Indonesia. Pada dekade 1990, Timor-Leste memiliki satu universitas dan satu politeknik. Resimen Mahasiswa (Menwa) dibentuk di kampus-kampus tersebut. Seperti halnya di Indonesia, Resimen Mahasiswa ini menjadi jalur bagi ABRI untuk melakukan indoktrinasi tambahan kepada mahasiswa.¹²⁹ Di Timor-Leste, ini menjadi cara bagi ABRI untuk menyusup ke dalam organisasi-organisasi mahasiswa dan kelompok-kelompok klandestin di kampus. Mahasiswa Timor-Leste yang kuliah di Jawa dan Bali diharuskan bergabung dalam organisasi resmi mahasiswa dan pelajar Timor-Leste, Impettu (Ikatan Mahasiswa, Pemuda, dan Pelajar Timor Timur).¹³⁰ Banyak orang Timor-Leste berada dalam pemantauan intelijen.

Pasukan pembunuh

116. Pada awal dekade 1990, sebuah pasukan paramiliter gaya baru muncul sebagai upaya ABRI untuk mengendalikan perlawanan klandestin kota yang semakin berkembang. Kelompok yang dikenal sebagai "Ninja" ini beroperasi di malam hari dengan berbaju hitam dan bertopeng.¹³¹ Mereka ditakuti karena peran mereka dalam menghilangnya semakin banyak orang yang dicurigai sebagai anggota Resistansi. Mereka pada kenyataannya adalah pasukan pembunuh.*

117. Pada 1995, muncul kelompok baru yang disebut Gardapaksi† (Garda Muda Penegak Integrasi). Pada dasarnya ia merupakan penerus kawan Ninja, dengan fokus serupa untuk membidik Resistansi klandestin. Kelompok ini memiliki hubungan erat dengan Kopassus dan dibentuk oleh menantu Presiden Soeharto, perwira Kopassus Kolonel Prabowo, pada Juli 1995.¹³² Walaupun organisasi ini secara resmi dimaksudkan untuk membantu pemuda Timor dalam menjalankan usaha kecil, para anggotanya segera mengembangkan usaha penyelundupan, judi, dan jasa perlindungan yang ilegal atau semi-legal. Selain itu, mereka terus membidik dan mengganggu gerakan klandestin, seperti halnya pasukan Ninja. Gardapaksi berkembang pesat: pada awal 1996, ia memiliki 1.100 anggota; pada April, diumumkan bahwa ada rencana untuk menambahkan 1.200 anggota setiap tahunnya; dan pada Mei tahun itu, 600 anggota dikirim ke Jawa untuk menerima pelatihan dari Kopassus.¹³³ Walaupun ada hubungan terang-terangan dengan Kopassus, dua tahun setelah pembentukan kelompok ini,

* Perilaku "kelompok Ninja" ini mirip dengan 'penembak misterius' (Petrus) di Jawa di awal dekade 1980, walaupun mereka memiliki maksud yang berbeda. Diprakarsai oleh Jenderal Benny Moerdani, penembak misterius menargetkan penjahat dan membiarkan jasadnya di depan umum.

† Kadang-kadang dieja Gadapaksi.

ketua Gardapaksi, Marçal de Almeida, mengungkapkan ketidaksenangannya bahwa organisasinya dikenal sebagai sarang *mauhu*, istilah dalam bahasa Tetum untuk intelijen militer. Kemunculan Gardapaksi terjadi bersamaan dengan naiknya pamor Kopassus dibanding Kostrad di Timor-Leste. Dengan dominasi Kopassus, terjadi pergeseran pada operasi psikologis yang dirancang untuk menyusup, mengintimidasi, dan menghancurkan jaringan Resistansi klandestin. Gardapaksi adalah unsur garis depan dalam strategi ini. Pada 1995, berbagai kelompok paramiliter di Timor-Leste menerima pelatihan militer di Aileu, yang dilakukan oleh Kopassus. Gardapaksi berlanjut sampai ia digantikan oleh berbagai kelompok milisi pada 1998 – 1999.

Milisi, 1998 – 1999

118. Banyak di antara milisi yang bermunculan pada 1998 – 1999 berakar dalam kelompok-kelompok yang telah dibentuk jauh lebih awal dalam periode pendudukan. Tabel di bawah menunjukkan sejarah milisi Timor, termasuk nama pemimpin Timor mereka, sesuai dengan sektor dan distrik, yang dibentuk pada 1975 – 1999.

| Tabel 2: Milisi-milisi di Timor-Leste, 1975 – 1999 | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------|---|
| Sektor A: Timur Komandan: Joanico Césario Belo (Sersan Kopassus Timor Timur) | | | | |
| Distrik | Nama | Pemimpin Timor | Waktu pembentukan | Latar belakang/hubungan |
| Lautém | Jati Merah Putih | José da Conceição | 1985 | Tim Alfa awalnya didirikan oleh Kopassus pada 1985; diganti namanya menjadi JMP pada 1999. |
| Viqueque | Makikit; 59/75 Junior/ Naga Merah | Alfonso Pinto (Lafaek) Alvaro de Jesus | 1983 1999 | Disponsori oleh Kopassus. Asal-usul dari pemberontakan Viqueque pada 1959. |
| Baucau | Saka | Joanico C. Belo (Kopassus) | 1983 | Dibentuk oleh Kopassus dari mantan Falintil dan paramiliter lama Baucau, Railakan, 1959 – 1975. |
| | Sera | Sera Malik | 1986 | Didirikan oleh Kopassus. |

| | | | | |
|----------|---------------------------|--|--------------|---|
| | Forum Komunikasi Partisan | Antonio Monis | 1975 | Dibentuk kembali pada 1999 dari anggota lama Partisan. |
| Manatuto | Mahadomi | Aleixo de Carvalho | 1999 | Pendiri dan penasihat Vidal Doutel Sarmento adalah bupati dan anggota kehormatan Kopassus |
| | Morok | Filomeno Lopes da Cruz (April 1999: Thomas de Aquino Kalla | Sekitar 1995 | |

Sektor B: Tengah
Komandan: Eurico Guterres
(mantan pemimpin kelompok “ninja” Gardapaksi, Dili, awal dekade 1990.)

| Distrik | Nama | Pemimpin Timor | Waktu pembentukan | Latar belakang/hubungan |
|---------|---|------------------------------------|-------------------|---|
| Dili | Aitarak | Eurico Guterres | 1999 | Milisi Gardapaksi di Dili awal dekade 1990; dilatih oleh Kopassus |
| Liquiçá | BMP (Besi Merah Putih) | Manuel de Sousa | 27 Des 1998 | Hubungan langsung dengan militer—berbasis di Koramil Maubara |
| Ermera | DMI (Darah Merah Integrasi); Ramelau (nama gunung di sektor tengah) Naga Merah Tim Pancasila | Miguel Babo Manuel de Sousa | April 1999 | Turunan dari Partisan dan Wanra |

Sektor C: Baratdaya

Komandan: Cancio Lopes de Carvalho

| Distrik | Nama | Pemimpin Timor | Waktu pembentukan | Latar belakang/hubungan |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Ainaro | Mahidi (Mati Hidup untuk Indonesia) | Cancio Lopes de Carvalho | 17 Des 1998 | Komandan militer Ainaro |
| Manufahi | Ablai | Nazario Corte Real | 27 Mar 1999 | Hubungan dengan Kopassus |
| Covalima | Laksaur (sejenis burung) | Olivio Mendonca Moruk | | Bupati (militer), dan komandan militer Covalima |
| Aileu | Ahi (Aku Hidup untuk Integrasi) | Horacio Araújo | 27 Mar 1999 | Dibentuk dan didukung oleh pemerintah kabupaten. |

Sektor D: Barat

Komandan: João Tavares (mantan pemimpin paramiliter Halilintar, bagian dari operasi-operasi rahasia prainvasi 1975)

| Distrik | Nama | Pemimpin Timor | Waktu pembentukan | Latar belakang/hubungan |
|----------|---|----------------|----------------------------------|--|
| Bobonaro | Halilintar; Dadurus Merah Putih; Buntur; Armui (Aku Rela Mati untuk Integrasi); Kaer Metin Merah Putih (Pegang Kuat Merah Putih); Harimau Merah Putih; Saka Loromanu (Saka Barat); Firmi Merah Putih (Penganut Merah Putih) | João Tavares | 1975; dibentuk kembali pada 1994 | Hubungan lama dengan militer melalui Halilintar. |
| Oecussi | Sakunar (Kalajengking) | Simão Lopes | April 1999 | Terkait dengan Kopassus |

Sumber: Penelitian dan kompilasi CAVR

Pembentukan milisi

119. ABRI mulai memobilisasi kelompok-kelompok milisi di seluruh Timor-Leste pada pertengahan sampai akhir 1998. Milisi-milisi ini dibentuk sebagai tanggapan langsung atas kebebasan baru orang Timor-Leste untuk berkampanye bagi kemerdekaan, setelah kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 dan pengumuman sebulan kemudian oleh penerusnya, Presiden BJ Habibie, bahwa Timor-Leste bisa mendapatkan opsi 'otonomi luas.' Setelah Habibie melangkah lebih jauh pada Januari 1999 dan menawarkan kepada Timor-Leste pilihan antara otonomi dan kemerdekaan, kelompok-kelompok milisi menjamur di semua distrik.

120. Dalam banyak hal, pembentukan milisi hanyalah merupakan puncak dari strategi militerisasi yang telah digambarkan di atas. Dalam pembentukan milisi, TNI memanfaatkan berbagai jenis pasukan pembantu beranggotakan orang Timor-Leste yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun sejak 1975. Beberapa kelompok milisi, seperti Tim Saka dan Tim Sera di Baucau, Tim Alfa di Lautém, dan Tim Makikit di Viqueque, sudah ada sejak satu dasawarsa atau lebih. Halilintar di Bobonaro bermula dari satuan Partisan pada bulan-bulan menjelang invasi, dan setelah vakum selama beberapa tahun, dihidupkan kembali pada 1994 untuk membantu ABRI dalam kampanye melawan gerakan klandestin yang merebak di distrik tersebut. Yang lainnya adalah turunan lanjut dari kelompok-kelompok paramiliter sebelumnya. Pemimpin milisi Mahidi di Ainaro juga pernah memimpin para "sukarelawan" yang meneror Ainaro di awal 1990-an.

121. Kelompok milisi yang lain merekrut pemimpinnya dari pasukan pembantu resmi seperti Wanra, Hansip, dan Gardapaksi. Sebuah dokumen militer bertanggal April 1998 menunjukkan bahwa terdapat 12 tim paramiliter ketika itu, yang meliputi setiap distrik di Timor-Leste kecuali Dili dan Oecussi. Dari dokumen tersebut jelas bahwa tim-tim ini, yang antara lain adalah Tim Saka, Sera, Alfa, Makikit, Halilintar, dan Morok—yang semuanya mempertahankan nama tersebut ketika menjelma menjadi milisi—merupakan bagian dari struktur teritorial.¹³⁴ Cepatnya milisi tersebut dimobilisasi pada 1999 terutama adalah karena mereka mampu memanfaatkan struktur yang sudah ada. Pendahulu kelompok-kelompok milisi utama terangkum dalam Tabel 2 pada paragraf 118 di atas.

122. Keseluruhan periode menjelang dan langsung setelah Jajak Pendapat terjadi dengan latar kekerasan. Sebagian besar kekerasan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi, dengan pasukan TNI yang memainkan peran pendukung atau terlibat langsung. Peran angkatan bersenjata Indonesia dalam merencanakan dan mendalangi kekerasan ini terdokumentasi dengan baik. Penyelidikan oleh Komisi Nasional HAM Indonesia dan Komisi Penyelidik Internasional atas Timor-Leste (ICIET) dukungan PBB yang dilakukan segera setelah terjadinya gelombang kekerasan, dan oleh Unit Kejahatan Berat (Serious Crimes Unit, SCU) dukungan PBB di Timor-Leste selama misi-misi UNTAET dan UNMISSET, serta banyak kesaksian dan submisi yang diterima oleh CAVR dan penelitian oleh CAVR sendiri, semua membawa kepada kesimpulan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa militer Indonesia benar-benar terlibat secara mendalam dalam segala aspek kekerasan yang terjadi, mulai dari pembentukan awal

kelompok-kelompok milisi sampai kepada menjalankan tahap akhir dan yang paling menyeluruh dari kekerasan pada September – Oktober 1999.

123. Selain bukti-bukti sejarah yang sudah disebut, terdapat banyak kumpulan bukti lain yang menengarai bahwa milisi dibentuk, didukung, dan dikendalikan oleh TNI. Bukti-bukti ini terangkum di bawah ini.*

Keterlibatan TNI dalam pembentukan milisi-milisi

124. Pejabat senior militer Indonesia terlibat dalam perencanaan, pembentukan, dan pelatihan milisi. Pada Februari 1999, mantan pemimpin Partisan, Tomas Gonçalves, yang mengklaim bahwa ia ditawari namun menolak untuk menempati posisi senior dalam struktur milisi, berbicara kepada media internasional dan menjelaskan peran kunci personel militer dalam pembentukan milisi, sambil menyebut komandan Korem, Kolonel Tono Suratman, dan komandan Kodam IX Udayana Mayor Jenderal Adam Damiri, serta menyebut peran besar yang dimainkan oleh satuan intelijen SGI yang didominasi Kopassus.^{† 135} Tomas Gonçalves mengatakan:

Perintahnya datang dari Pangdam, [Mayor Jenderal] Adam Damiri, kepada Komandan Korem Timor Timur dan Komandan Kopassus Yayat Sudrajat—hapuskan seluruh CNRT, semua orang prokemerdekaan, keluarga baik orangtua, anak lelaki, perempuan, dan cucu mereka. Komandan Sudrajat menjanjikan pembayaran Rp200.000 kepada siapa saja yang ingin menjadi milisi.¹³⁶

125. Dalam dakwaan Unit Kejahatan Berat terhadap Jenderal Wiranto dan yang lainnya, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat menjelaskan mengenai serangkaian pertemuan di mana pejabat militer senior merencanakan pembentukan dan perekrutan milisi:

* Ringkasan Komisi mengenai bukti kaitan antara milisi dan TNI sangat mengandalkan laporan oleh Geoffrey Robinson, *East Timor 1999: Crimes Against Humanity*, Juli, 2003, hal.82-129, yang diberikan OHCHR kepada Komisi sebagai submisi.

† Pada 1993, SGI diubah namanya menjadi Satuan Tugas Intelijen, namun terus dikenal luas sebagai SGI (Lihat 4.2: ABRI dan perannya di Timor-Leste). Pada 1999, satuan ini terdiri atas personel satuan Kopassus, yang disebut Satgas Tribuana, di bawah komando Letnan Kolonel Yayat Sudrajat. Kopassus telah memainkan peran yang dominan dalam struktur militer Indonesia di Timor-Leste sejak pertengahan dekade 1990. Sejumlah perwira senior yang memiliki latar belakang Kopassus yang pernah bertugas di Timor-Leste memainkan peran penting selama Jajak Pendapat. Termasuk di antara mereka Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang resminya adalah wakil militer utama satuan tugas Indonesia yang diberi tugas untuk berhubungan dengan UNAMET, tapi yang juga diyakini telah memainkan peran penting dalam pembentukan milisi selama masa ini. Selain Letnan Kolonel Sudrajat, Danrem Kolonel Tono Suratman juga sebelumnya pernah bertugas dengan Kopassus. Atasan langsungnya, Mayor Jenderal Adam Damiri, komandan Kodam Udayana yang berbasis di Bali, juga merupakan anggota Kopassus. Di tingkat kabinet, tokoh utama lainnya yang merancang kebijakan mengenai Timor-Leste adalah Menteri Koordinasi bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (purn) Feisal Tanjung, yang adalah salah satu dari empat menteri di kabinet dengan latar belakang Kopassus. Yang lainnya adalah Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, yang keterlibatan luasnya dengan Timor-Leste sudah dimulai sejak masa komando pra-invasi dengan Tim Susi. (Robinson, hal.28 – 29.)

1. Pada atau sekitar Agustus 1998 [komandan Daerah Militer IX Udayana, Mayor Jenderal] Adam Rachmat Damiri mendatangkan seorang pemimpin pro-Indonesia dari Timor-Leste naik pesawat ke Denpasar, Bali, untuk menghadiri sebuah pertemuan. Pada pertemuan ini, Damiri meminta pemimpin asal Timor-Leste ini membentuk kelompok untuk mendukung dan mendorong integrasi.
2. Pada atau sekitar Agustus 1998 Damiri berkunjung ke Dili dan bertemu dengan para komandan TNI dan pemimpin pro-Indonesia asal Timor-Leste. [Komandan Korem 164] Kolonel Suhartono Suratman hadir pada pertemuan tersebut. Damiri menjelaskan kepada kelompok yang hadir tersebut bahwa perhatian internasional diarahkan pada Timor-Leste dan ini merupakan masalah bagi Indonesia. Ia mengatakan pada mereka bahwa mereka perlu merancang rencana untuk menciptakan organisasi-organisasi yang akan menyebarkan rasa pro-Indonesia di seluruh Timor-Leste. Ia mengatakan pada mereka bahwa mereka harus membentuk pasukan pertahanan sipil yang kuat, didasarkan pada model-model dukungan TNI sebelumnya, dan bahwa pasukan ini harus dikembangkan dan dibangun untuk membela integrasi.
3. Pada atau sekitar November 1998, Damiri berkunjung ke Timor-Leste. Dalam kunjungan ini, ia bertemu lagi dengan para pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia di Dili, termasuk orang-orang yang di kemudian hari menjadi pemimpin kelompok-kelompok milisi. Damiri meminta orang-orang yang hadir untuk bersatu dan membantu TNI memerangi kelompok prokemerdekaan Front Revolusioner bagi Timor-Leste Merdeka [Frente Revolucionário de Timor-Leste Independente, Fretilin]. Dalam pertemuan dengan pemimpin pro-Indonesia ini, Damiri memuji pemimpin milisi kelak, Eurico Guterres, sebagai seorang pemuda yang bersedia membela integrasi dan mengatakan bahwa ia siap memberi Guterres lima puluh juta rupiah untuk memulai kerjanya.
4. Pada atau sekitar November 1998, Tono Suratman bertemu dengan para pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia di markasnya di Dili. [Komandan Tribuana, Letnan Kolonel] Yayat Sudrajat hadir pada pertemuan tersebut. Suratman mengatakan kepada kelompok yang hadir tersebut bahwa ia ingin agar Eurico Guterres, yang kelak akan menjadi pemimpin milisi, membentuk organisasi baru untuk membela integrasi seperti kelompok pemuda pro-Indonesia Gardapaksi.
5. Pada awal 1999, [Mayor Jenderal] Zacky Anwar Makarim [yang menjabat sebagai kepala badan intelijen militer, BIA, sampai Januari 1999] menerima para pendiri kelompok pro-Indonesia Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT) di kantornya di Jakarta. Selama pertemuan tersebut ia mengatakan bahwa perang gerilya akan diperlukan untuk dapat mengatasi pendukung prokemerdekaan jika opsi otonomi kalah dalam Jajak Pendapat.
6. Pada atau sekitar Februari 1999, Damiri bertemu dengan pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia di markas Kodam IX Udayana di Denpasar, Bali.

Damiri mengatakan kepada mereka bahwa TNI siap memberi dukungan secara rahasia bagi pasukan-pasukan pro-Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dukungan ini harus bersifat rahasia untuk menghindari kecaman dan kritikan internasional. Damiri meminta orang-orang yang hadir untuk mengumpulkan orang Timor-Leste yang pernah berdinasi dengan TNI. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus bertemu dengan Suratman untuk instruksi lebih lanjut.

7. Pada atau sekitar Februari 1999, Suratman bertemu dengan seorang pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di Dili. Ia mengatakan kepadanya bahwa karena TNI berada di bawah rezim yang reformis, ia tidak dapat mengambil bagian dalam operasi terbuka melawan gerakan kemerdekaan. Suratman meminta pemimpin pro-Indonesia tersebut membentuk kelompok milisi. Suratman mengatakan bahwa TNI siap memberi dukungan dalam bentuk apapun yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok milisi.
8. Pada atau sekitar Februari 1999, Yayat Sudrajat bertemu dengan anggota TNI dan pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia di markas Satuan Tugas Intelijen di Dili. Sudrajat mengatakan kepada kelompok tersebut bahwa Satuan Tugas Intelijen memiliki daftar pendukung kemerdekaan yang akan dibunuh. Ia menyatakan bahwa Satuan Tugas Intelijen dan kelompok pro-Indonesia akan bekerjasama melakukan pembunuhan-pembunuhan ini. Ia mengatakan bahwa Kopassus berpakaian preman akan mulai melakukan pembunuhan pendukung prokemerdekaan.
9. Pada atau sekitar Maret 1999, [Asisten Operasional Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Mayor Jenderal] Kiki Syahnakri bertemu dengan pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia di markas besar TNI di Jakarta. Syahnakri mengatakan kepada kelompok tersebut bahwa TNI akan mendukung upaya pro-Indonesia mereka dan bahwa Makarim bertanggung jawab melakukan koordinasi atas segala aktivitas menjelang Jajak Pendapat. Syahnakri mengatakan kepada mereka bahwa persenjataan sudah dikirim ke Timor-Leste, dan bahwa sekembalinya mereka ke Dili, mereka harus menghubungi Suratman untuk mengatur pembagian persenjataan tersebut.
10. Pada awal 1999, [Gubernur Abilio] Soares menganjurkan para bupati untuk membentuk kelompok-kelompok milisi di kabupaten mereka masing-masing. Beberapa dari para bupati ini menjadi pemimpin milisi.¹³⁷

126. Satu aspek dari peran TNI dalam pembentukan milisi adalah keterlibatannya secara langsung dalam perekrutan. Pada awal 1999, kepala staf Korem saat itu, Letnan Kolonel Supardi, dikutip mengatakan bahwa TNI telah merekrut 1.200 anggota milisi dan akan meneruskan perekrutan sampai Maret.¹³⁸ Selain menggunakan insentif keuangan sebesar Rp200.000,00 untuk mendorong perekrutan, TNI juga menggunakan ancaman dan pemaksaan (lihat lebih jauh di bawah). Ditetapkan berbagai target dalam perekrutan anggota milisi di tiap

* Saat itu, Rp200.000,00 setara dengan USD26,66.

distrik—yakni sekitar sepuluh orang per desa.¹³⁹ Selain itu, pelatihan milisi dilakukan sesuai aturan yang digariskan dalam berbagai instruksi dan laporan yang diterbitkan oleh perwira senior sampai pada tingkat teratas di dalam struktur komando teritorial.¹⁴⁰

Dukungan TNI bagi milisi

127. Para anggota TNI dan pemerintahan Indonesia memberi status resmi pada milisi. Mereka melakukan hal ini, misalnya, dengan menghadiri upacara pengangkatan anggota milisi dan pawai-pawai di seantero Timor-Leste. Komandan Korem, Kolonel Suratman, bertemu dan memberi “bimbingan” kepada anggota milisi Besi Merah Putih (BMP) di markas Kodim 1638 pada 16 April 1999, sepuluh hari setelah pembantaian warga sipil di Gereja Liquiçá dan sehari sebelum amukan milisi di Dili, di mana BMP juga ambil bagian.¹⁴¹ Sampai pada 8 Mei 1999 pun Komandan Korem Timor Timur Kolonel Suratman menghadiri upacara pembentukan milisi Mahadomi di Manatuto. Ia dan beberapa tokoh lain, termasuk Gubernur Abilio Soares, Bupati Dili, Domingos Soares, dan asisten operasional angkatan darat saat itu, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, juga hadir pada pawai pada 17 April, saat Eurico Guterres berbicara kepada anggota milisi dan menganjurkan mereka membunuh “orang-orang yang telah mengkhianati integrasi”. Di akhir pawai tersebut, para anggota milisi menyebar dan menyerang Dili. Salah satu sasaran mereka adalah rumah Manuel Carrascalão, tempat ratusan orang berlindung untuk menghindari kekerasan milisi di distrik mereka. Di rumah tersebut, mereka membunuh 12 orang.¹⁴²

128. Selain unjuk dukungan ini, penguasa Indonesia memberi milisi dukungan resmi dengan memperlakukan mereka sebagai bagian dari struktur pembantu resmi militer. Dalam komunikasi resmi, kelompok-kelompok milisi ini sering disebut sebagai bagian dari kelompok-kelompok pertahanan sipil.¹⁴³ Sejak April 1999, kelompok-kelompok milisi juga secara resmi diakui sebagai Pam Swakarsa (organisasi sukarelawan keamanan sipil).¹⁴⁴

Partisipasi TNI dalam kegiatan milisi

129. Hubungan dekat antara TNI dan milisi terlihat jelas dari tumpang-tindihnya keanggotaan mereka. Banyak anggota milisi yang juga adalah anggota TNI aktif, suatu fakta yang diperkuat oleh dokumen-dokumen resmi militer dan pemerintah Indonesia.¹⁴⁵ Setidaknya satu kelompok milisi (Tim Saka) telah merupakan ‘kompi khusus’ yang sepenuhnya terintegrasi dalam struktur TNI sejak beberapa tahun sebelumnya.¹⁴⁶ Selain itu, pemimpin milisi diperlakukan sebagai bagian aparat keamanan resmi dan diundang dalam pertemuan-pertemuan bersama tentara, polisi, dan pejabat pemerintah.¹⁴⁷

Pemberian pelatihan, persenjataan, dan dukungan operasional

130. TNI juga memberi pelatihan, persenjataan, dan dukungan operasional bagi milisi. Peran TNI dalam melatih milisi diperkuat oleh beberapa sumber termasuk berbagai dokumen, telegram Indonesia, dan setidaknya satu pernyataan kepada media oleh Letnan Kolonel Supardi, kepala staf Korem di bulan-bulan awal 1999.¹⁴⁸ TNI menyediakan persenjataan, dan kontrol atas penggunaannya juga diatur oleh TNI.¹⁴⁹ Banyak bukti mengenai hal ini ditemukan dalam dokumen-dokumen, juga kenyataan bahwa milisi memiliki persenjataan modern yang jenisnya sama dengan yang digunakan oleh tentara dan polisi Indonesia.¹⁵⁰ Jenderal Wiranto sendiri mengakui kepada para penyelidik bahwa:

Kadang-kadang senjata disediakan, tapi ini bukan berarti mereka [milisi] membawa senjata ke mana pun mereka pergi. Senjata-senjata tersebut disimpan di markas Koramil.¹⁵¹

131. Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat membuat tuduhan-tuduhan berikut dalam dakwaannya terhadap Jenderal Wiranto dan yang lainnya:

1. Pada atau sekitar Maret 1999, [Gubernur Abilio] Soares mengadakan rapat di kantornya di Dili. [Komandan Korem 164, Kolonel Suhartono] Suratman dan [komandan unit Kopassus, Satgas Tribuana, Letnan Kolonel Yayat] Sudrajat hadir pada pertemuan tersebut. Soares mengatakan kepada kelompok pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia bahwa para pendukung kemerdekaan yang mencari perlindungan kepada pastor dan suster-suster adalah komunis yang harus dibunuh. Ia juga mengatakan kepada kelompok tersebut bahwa TNI akan menyediakan senjata kepada kekuatan pro-Indonesia. Ia mengatakan apabila TNI tidak dapat menyediakan senjata yang cukup, ia akan menyediakannya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia akan menyediakan dana bagi organisasi pro-Indonesia, BRTT.
2. Pada atau sekitar Maret 1999, Yayat Sudrajat dan anggota TNI yang lain menyampaikan sejumlah besar senjataapi kepada seorang pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia. Sudrajat meminta pemimpin Timor-Leste tersebut untuk memberi senjata kepada kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia.
3. Pada atau sekitar April 1999, [kepala badan intelijen angkatan bersenjata BIA] Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim mengatakan kepada para komandan TNI dan pemimpin-pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia bahwa mereka harus bekerja keras untuk otonomi karena apabila otonomi kalah, akan lebih banyak darah yang tumpah. Ia menawarkan pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia untuk menggunakan senjata otomatis dan memerintahkan Suratman mengumpulkan dan membagi-bagikan senjataapi tersebut.
4. Pada atau sekitar April 1999, Suratman, setelah diminta oleh Makarim untuk menyediakan senjata api otomatis kepada pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia, memerintahkan bawahannya, Sudrajat, untuk mengatur pengumpulan dan distribusi senjata api tersebut.¹⁵²

132. TNI juga memberi dukungan operasional kepada para milisi. Terkadang dukungan ini berupa penggunaan markas dan pos-pos TNI oleh milisi. Dalam kasus milisi yang dibentuk jauh sebelum 1999, penggunaan basis TNI seperti ini hanyalah merupakan penerusan hubungan lama. Satu contoh adalah penggunaan markas Kopassus oleh Tim Alfa di Lospalos.

Operasi gabungan TNI-milisi

133. Dalam operasi gabungan, pasukan TNI sering hadir ketika terjadi penyerangan oleh milisi, dengan pasukan TNI berada pada posisi di belakang anggota milisi dan menembak hanya untuk membela milisi ketika mereka diserang.¹⁵³ Satu operasi milisi yang dihadiri oleh pasukan TNI adalah pada pembantaian di Gereja Liquicá pada April 1999. Partisipasi anggota TNI menjadi semakin jarang setelah kedatangan UNAMET pada Juni 1999, walaupun ini terus berlanjut selama minggu-minggu menjelang Jajak Pendapat, termasuk dalam kejadian-kejadian berpamor tinggi seperti penyerangan pada kantor UNAMET di Maliana (Bobonaro) pada 29 Juni 1999. Operasi gabungan TNI-milisi yang luas kembali terjadi setelah Jajak Pendapat pada September 1999, setelah staf internasional dipaksa meninggalkan distrik-distrik dan terkepung di kantor pusat UNAMET di Dili atau telah meninggalkan negeri ini.¹⁵⁴

Pemberian dukungan keuangan dan materi oleh TNI dan badan-badan lainnya

134. Akhirnya, terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa pejabat sipil dan militer Indonesia mendanai milisi dan menyediakan sumberdaya untuk mereka gunakan. Sekitar Rp39 miliar (atau USD5,2 juta) disalurkan kepada kelompok-kelompok milisi melalui pemerintah sipil Indonesia.¹⁵⁵ Rencana anggaran untuk “sosialisasi otonomi” disusun oleh setiap kabupaten, yang mencakup alokasi dana untuk milisi, dan diserahkan kepada gubernur untuk disahkan. Dana tambahan disediakan melalui cabang-cabang pemerintahan Indonesia dan TNI yang lain. Terdapat juga bukti bahwa kelompok politik prointegrasi, FPDK (Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan) dan BRTT (Barisan Rakyat Timor Timur), yang memiliki hubungan erat dengan pemerintahan sipil (lihat segmen 4.4 tentang pemerintahan sipil), digunakan untuk menyalurkan dana dari pemerintah dan militer kepada milisi.¹⁵⁶ FPDK dikepalai oleh Bupati Dili, Domingos Soares, sementara ketua BRTT adalah Francisco Lopes da Cruz, mantan presiden UDT yang menjadi wakil gubernur Timor Timur pada tahun-tahun awal pendudukan, dan pada 1999 menjadi duta besar keliling dengan misi menganjurkan pandangan Indonesia tentang Timor-Leste secara internasional.¹⁵⁷

135. Hubungan dekat antara milisi dan TNI serta penguasa sipil Indonesia ini membuat Komisi Penyelidik PBB menyatakan dalam laporannya bahwa:

.....
* CAVR menyimpan beberapa anggaran seperti ini.

1. Terdapat bukti bahwa Tentara Indonesia dan penguasa sipil di Timor-Leste dan beberapa di Jakarta menerapkan kebijakan untuk menggunakan milisi untuk memengaruhi hasil Jajak Pendapat. Pendekatan yang digunakan adalah untuk memberi kesan bahwa orang Timor-Leste saling berperang.
2. Terdapat bukti bahwa kebijakan menggunakan milisi dijalankan oleh Kopassus dan badan intelijen TNI lainnya. Kebijakan ini terwujud dalam perekrutan aktif, pendanaan, penyediaan senjata, dan bimbingan serta penyediaan dukungan logistik bagi milisi dalam intimidasi dan serangan terornya.
3. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, anggota militer Indonesia, selain mengarahkan milisi, juga terlibat langsung dalam intimidasi dan serangan teror tersebut. Intimidasi, teror, perusakan harta benda, pemindahan, dan evakuasi paksa tidak akan mungkin terjadi tanpa keterlibatan aktif tentara Indonesia serta pengetahuan dan restu komando militer tertinggi.
4. Polisi Indonesia, yang bertanggung jawab atas keamanan menurut Kesepakatan 5 Mei,¹⁵⁸ tampak telah terlibat dalam tindak intimidasi dan teror, dan dalam kasus-kasus lain tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini.
5. Komisi beranggapan bahwa pada akhirnya militer Indonesia adalah yang bertanggung jawab atas intimidasi, teror, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya yang dialami oleh orang Timor-Leste sebelum dan sesudah Jajak Pendapat. Selanjutnya, bukti yang dikumpulkan sampai saat ini menunjukkan bahwa orang-orang tertentu terlibat langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia.¹⁵⁸

Konsekuensi kerjasama milisi-TNI

136. Ian Martin, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB selama masa UNAMET, mengatakan kepada Komisi:

[W]akil Jaksa untuk Kejahatan Berat yang ditunjuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bukti yang cukup untuk menuntut kepemimpinan tertinggi TNI dengan kejahatan terhadap umat manusia... Dalam pendapat saya, tidak ada lagi keraguan bahwa penghancuran Timor-Leste bukan semata merupakan hasil respons emosional milisi dan pembangkangan orang Timor-Leste di dalam TNI: ini merupakan operasi yang direncanakan dan dikoordinasi di bawah arahan TNI.¹⁵⁹

* Perundingan antara Indonesia dan Portugal di New York pada 5 Mei 1999 membawa hasil bahwa kedua pemerintahan memercayai Sekretaris Jenderal PBB untuk mengorganisasi serta menjalankan Jajak Pendapat untuk menentukan apakah rakyat Timor-Leste menerima atau menolak otonomi khusus bagi Timor-Leste di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia mengemban tugas pengamanan selama Jajak Pendapat.

137. Kekerasan pada 1999 dibahas di bagian lain dalam laporan ini (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik; Bab 7.2 tentang pembunuhan dan penghilangan; Bab 7.3 tentang pemindahan paksa dan kelaparan; Bab 7.4 tentang penahanan dan penyiksaan; dan Bab 7.7 tentang kekerasan seksual). Dalam kaitannya dengan bab ini, penting untuk diperhatikan adanya hubungan erat antara TNI dan kelompok-kelompok milisi Timor-Leste, serta dominasi TNI atas pemerintahan sipil dan kepolisian di Timor-Leste. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa masuk ke Timor-Leste pada 1999, milisi yang didukung TNI meneror penduduk, tanpa intervensi oleh polisi Indonesia.¹⁶⁰

138. Pihak berwenang Indonesia menyatakan bahwa kelompok-kelompok milisi ini adalah ungkapan spontan dukungan setempat untuk integrasi, dan bahwa kekerasan merupakan hasil konflik antara orang Timor-Leste yang prokemerdekaan dengan yang prointegrasi. Tapi, tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk mencegah ancaman-ancaman ini. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian di Liquiçá dan Dili pada April 1999 tidak pernah dicari dan dibawa ke pengadilan. “Pelucutan senjata” milisi pada Agustus 1999 jelas-jelas merupakan sandiwara yang dirancang untuk memberi kesan bahwa milisi membalas keputusan Falintil untuk menarik pasukannya (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

139. Ketika kekerasan besar-besaran terjadi setelah Jajak Pendapat, TNI mencoba menggambarkan hal ini sebagai kekerasan spontan akibat kejutan dan kemarahan atas hasil yang mendukung kemerdekaan. Tapi, implementasi yang cepat dan luasnya skala kekerasan dan penghancuran menengarai suatu operasi yang direncanakan baik dengan dukungan logistik yang canggih.¹⁶¹ Walaupun milisi sering berada di garis depan aktivitas seperti ini, dalam banyak kasus mereka didukung secara langsung oleh anggota militer dan polisi.¹⁶² Mereka pada dasarnya menjalankan rencana TNI. Dan memang, ancaman milisi untuk menghancurkan Timor-Leste jika pilihan kemerdekaan yang menang pernah diperingatkan sebelumnya oleh Komandan Militer Timor Timur Kolonel Suratman beberapa bulan sebelum Jajak Pendapat, ketika ia mengatakan dalam wawancara dengan televisi Australia:

Saya mau sampaikan satu pesan: kalau pihak prokemerdekaan menang, bukan hanya Pemerintah Indonesia yang akan berurusan dengan hasilnya. PBB dan Australia juga akan harus mengatasi masalah itu, dan jika ini memang terjadi, tidak akan ada yang menang. Semuanya akan dihancurkan. Timor Timur tidak akan ada lagi seperti sekarang. Akan jauh lebih buruk dari[pada] 23 tahun yang lalu.¹⁶³

140. Selama masa menjelang Jajak Pendapat, penduduk sipil Timor-Leste diteror dan tidak dapat mengandalkan polisi atau pemerintahan sipil untuk menghormati hukum serta menegakkan hukum dan ketertiban. Militer dan polisi, yang bertugas melindungi penduduk, justru membiarkan dan mendukung kekerasan serta

intimidasi ini. Dengan penarikan mundur PBB dan pengamat internasional pada hari-hari setelah Jajak Pendapat,[†] kerjasama antara milisi dan TNI terjadi sangat terang-terangan dan keduanya berpartisipasi dalam pemindahan jumlah penduduk sipil yang amat besar ke Timor Barat dan daerah-daerah lain di Indonesia.¹⁶⁴ Selama proses ini, militer Indonesia, polisi, dan milisi Timor melakukan pembunuhan, kekerasan seksual, dan penganiayaan lainnya terhadap penduduk sipil.

Pemerintahan sipil

Pemerintahan sementara di Timor-Leste

141. Pada 18 Desember 1975, segera setelah melakukan invasi besar-besaran di Timor-Leste, Indonesia membentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT).[†] Kebanyakan posisi pemerintahan ini diisi oleh orang Timor-Leste yang prointegrasi dengan Indonesia, yang umumnya berasal dari partai Apodeti dan UDT. Anggota PSTT diangkat di Dili sementara pertempuran keras sedang berlangsung akibat dari invasi yang masuk makin jauh ke dalam wilayah pedalaman. Selama tujuh bulan masa tugasnya, Pemerintahan Sementara tersebut ternyata tidak memiliki kekuatan dalam membuat keputusan karena begitu dominannya militer Indonesia. Kesaksian mantan Gubernur Timor Timur Mario Carrascalão di depan Komisi menyebutkan:

Saya tidak bisa menganggap PSTT sebagai sebuah Pemerintah yang sebenarnya. Ketua Eksekutifnya adalah Arnaldo de Araújo, dengan Lopes da Cruz sebagai wakilnya. Ketua Dewan Rakyat adalah Guilherme Gonçalves. Dewan Rakyat itu baru mulai berfungsi... mereka berkumpul satu kali yaitu pada Mei 1976 di sini, hanya untuk membahas satu butir "piagam"-nya, yaitu, mengenai integrasi tanpa referendum.¹⁶⁵

142. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang No. 7/76, dan Presiden Soeharto menandatangani pada Juli 1976, Indonesia mengklaim bahwa integrasi Timor Timur secara resmi telah sempurna. Undang-Undang No. 7/76 memerintahkan pembentukan sebuah pemerintahan provinsi, dan untuk memberlakukan UU ini pada 30 Juli 1976, Pemerintah RI mengeluarkan Dekrit No.19/1976 yang menetapkan struktur pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten di Timor Timur. Aturan ini menerapkan struktur pemerintahan sipil baku yang berlaku di Indonesia terhadap Timor-Leste. Walau demikian, dengan sedikit perubahan aturan ini tetap mempertahankan struktur pemerintahan sipil Portugis: *concelho* menjadi kabupaten (distrik), *posto* menjadi kecamatan (subdistrik), *suco*

* Duabelas Pejabat Hubungan Militer PBB bertahan di Kedutaan Besar Australia di Dili setelah UNAMET pergi pada 14 September 1999. Mereka dilindungi oleh pasukan Kostrad.

† Pada bagian ini di laporan tertulis 'Timor Timur', untuk menunjukkan nama administratif pemerintahan Indonesia bagi wilayah tersebut. Istilah 'Timor-Leste' tetap digunakan untuk menyebut wilayah tersebut untuk maksud selain sebagai bagian pemerintahan Indonesia.

menjadi desa, dan *aldeia* menjadi kampung/dusun. Hasil kebijakan ini adalah jumlah satuan pemerintahan pada tingkat kabupaten dan kecamatan jauh melebihi apa yang umumnya berlaku di wilayah Indonesia lainnya. Terlebih lagi, seperti di wilayah Indonesia lainnya, militer Indonesia (ABRI) membangun struktur komando teritorial yang sejajar dengan pemerintahan sipil, yang artinya juga lebih banyak kehadiran militer di tingkat lokal di Timor-Leste dibandingkan dengan wilayah lain Indonesia.

Tabel 3: Struktur pemerintahan Indonesia, dengan satuan yang setara dalam sistem Portugis serta militer Indonesia

| Tingkat | Istilah Indonesia | Posisi pemerintahan | Kesetaraan Portugis | Komando militer yang sejajar |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| provinsi | provinsi | gubernur | <i>territory</i> | Korem |
| distrik (13) | kabupaten | bupati dan sekretaris | <i>concelhos</i> | Kodim |
| subdistrik (62) | kecamatan | camat dan pembantu camat | <i>postos administrativos</i> | Koramil |
| desa (442) | kelurahan/desa | lurah/kepala desa | <i>suco</i> | Babinsa |
| subdesa | kampung/dusun RW (Rukun Warga) RT (Rukun Tetangga) | kepala kampung | <i>aldeia/povoacã</i> | |
| RT | RT/RW | ketua RT | <i>bairro</i> | |

Sumber: Dokumen penelitian CAVR, arsip CAVR

Kedudukan Gubernur*

143. Selama rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, gubernur sebuah provinsi Indonesia ditunjuk sekali dalam lima tahun oleh presiden, dan selanjutnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional.[†] Perwira militer yang masih aktif atau sudah pensiun ditunjuk untuk memegang jabatan gubernur di hampir setengah dari seluruh provinsi di Indonesia. Di Timor-Leste, pemerintah RI menunjuk penduduk sipil asli Timor-Leste sepanjang masa pendudukan.

* Arnaldo dos Reis Araújo, 1976 – 1978, Apodeti; Guilherme Maria Gonçalves, 1978 – 1982, Apodeti; Mario Viegas Carrascalão, 1982 – 1987 dan 1987 – 1992, UDT; Abilio José Osorio Soares, 1992 – 1997 dan 1997– 1999, Apodeti.

† Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan ketua badan legislatif di daerah, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), secara formal merupakan penguasa tertinggi di suatu provinsi Indonesia.

144. Pada 4 Agustus 1976, Jakarta menunjuk Arnaldo dos Reis Araújo, pemimpin Apodeti, sebagai gubernur pertama, dan dengan demikian menjadikan Timor Timur sebagai provinsi baru. Ketua UDT, Francisco Lopes da Cruz, ditunjuk sebagai wakil gubernur. Araújo diganti pada 1978, setelah ia secara terang-terangan mengkritik Indonesia.¹⁶⁶ Dalam sebuah wawancara dengan wartawan Indonesia pada September 1980, Araújo berkata:

Pemerintah menunjukkan perhatian yang besar [untuk Timor Timur], tetapi sayangnya ini tidak ditujukan secara langsung kepada warga Timor Timur. Ini tidak ubahnya seperti pada zaman penjajahan Portugis: uang datang dari Portugal diberikan atas nama warga Timor Timur hanya untuk dikirim kembali ke Portugal atas nama pribadi orang yang dikirim oleh pemerintah Portugal sendiri.

145. Ia memberi saran kepada pemerintah Indonesia untuk:

[M]enciptakan situasi normal sesegera mungkin dan akhiri situasi teror, kekuasaan tanpa batas, kesewenang-wenangan, dan hukum rimba, anarki, monopoli ekonomi, dan lain-lain, sama seperti pada zaman penjajahan Portugis.¹⁶⁷

146. Pengganti Araújo, Guilherme Maria Gonçalves, adalah anggota Presidium Apodeti, salah seorang penandatangan Deklarasi Balibó dan seorang *liurai*. Ia tokoh pendukung aneksasi oleh Indonesia, dan merekrut banyak orang yang ikut membentuk satuan Partisan Timor Timur yang menyertai invasi militer Indonesia. Kekuasaannya sebagai gubernur berakhir pada 1982 setelah ia cekcok dengan Sekretaris Wilayah (Sekwilda), Kolonel Paul Kalangi, mengenai masalah penggunaan pajak kopi yang telah dibayar ke pemerintah daerah.¹⁶⁸

147. Selama tahun-tahun awal ini, pemerintahan sipil menghadapi banyak persoalan. Hal ini termasuk kurangnya personel, sulitnya komunikasi yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman bahasa Indonesia di antara orang Timor-Leste, dan pada tingkat kepemimpinan terjadi perseteruan antara anggota Apodeti dan UDT yang bekerja dengan orang Indonesia. Laporan polisi pada Maret 1983 menyatakan:

Sejak dibentuknya PSTT, penunjukan pejabat Pemda diprioritaskan pada eks-anggota partai Apodeti [baik sebagai gubernur, bupati, atau camat], sedangkan eks-anggota partai UDT hanya ditunjuk sebagai pembantu mereka. Namun banyak di antara mantan UDT dalam posisi administratif mempunyai hubungan buruk dengan atasan mereka sehingga jalannya Pemda belum sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁶⁹

148. Terlebih lagi, pada awal-awal tahun pendudukan ketika ABRI masih berperang hebat dengan pasukan Fretilin, masalah pemerintahan sipil merupakan hal yang tidak terlalu diprioritaskan.

149. Gubernur yang ketiga, Mario Viegas Carrascalão, salah seorang pendiri UDT, dilantik pada 18 September 1982. Ia menjabat selama dua periode, hingga Juni 1992.^{*} Carrascalão adalah salah seorang di antara segelintir orang Timor-Leste yang memiliki gelar sarjana pada dekade 1970, dan pernah menjadi anggota delegasi Indonesia ke PBB dari 1980 –1982.¹⁷⁰ Ia mengatakan kepada Komisi bahwa ia diangkat atas “instruksi” Jenderal Benny Moerdani.¹⁷¹ Selama Carrascalão menjabat sebagai gubernur, Timor-Leste mengalami proses ‘normalisasi’ dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan provinsi dikonsolidasikan dan Provinsi Timor Timur dijadikan sejajar dengan hampir semua provinsi di Indonesia. Di akhir 1988, Presiden Soeharto menandatangani Keppres No. 62/1988, yang secara resmi mengakhiri ketertutupan wilayah ini dan menormalkan kembali status Timor Timur sebagai provinsi.¹⁷² Mario Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa hanya setelah keputusan ini dibuat, kontrol militer terhadap Timor-Leste berkurang.¹⁷³

150. Setelah menduduki jabatan lima-tahunan yang kedua, Carrascalão diganti pada 1992 oleh Abilio Osario Soares, tokoh yang tidak terlalu memegang peranan[†] di Apodeti.¹⁷⁴ Pencalonan Soares didukung oleh menantu Presiden Soeharto, Letnan Kolonel Prabowo, yang pada waktu itu bertugas di Kopassus dan terlibat sangat dalam di Timor-Leste.¹⁷⁵ Abilio Soares menjadi gubernur sampai berakhirnya pendudukan Indonesia.

151. Mantan Ketua UDT, Francisco Lopes da Cruz, masih menjabat sebagai wakil gubernur sampai 1982. Ia digantikan oleh pejabat militer Indonesia, Brigadir Jenderal A.B. Saridjo, yang memegang jabatan sampai 1993.¹⁷⁶ Ia kemudian diganti lagi oleh perwira militer lain, yaitu Letnan Kolonel J. Hariwibowo, yang menjabat sampai 1999. Kedua wakil gubernur tersebut adalah mantan sekretaris wilayah daerah (sekwilda).

152. Pada 1987, Timor-Leste dibagi menjadi tiga wilayah administratif, yaitu: bagian timur dengan ibukota di Baucau; bagian tengah berpusat di Gleno; dan bagian barat dikendalikan dari Maliana (Bobonaro).[‡] Setiap wilayah ini diperintah oleh seorang asisten gubernur, yang biasanya seorang perwira militer.¹⁷⁷

Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda)

153. Secara resmi, jabatan eksekutif nomor dua di provinsi dipegang oleh sekretaris wilayah daerah (sekwilda). Kenyataannya, sebagaimana provinsi lain Indonesia, karena pemegang posisi ini berwenang mengendalikan anggaran provinsi, posisi ini menjadi

^{*} Mario Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa dia mengundurkan diri dari jabatan sebagai gubernur setelah Pembantaian Santa Cruz pada November 1991, di dalam Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, April 2003. Sesungguhnya, hal itu bertepatan dengan selesainya masa jabatannya yang kedua.

[†] Abilio Soares adalah adik dari tokoh Apodeti, José Osorio Soares, yang dibunuh ketika berada dalam tahanan Fretilin pada Januari 1976, di pantai selatan Timor-Leste.

[‡] Pembagian ini tidak sama dengan kelima divisi militer.

sangat berpengaruh. Pemegang posisi ini secara formal ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pada awalnya, warga Timor-Leste yang menduduki jabatan ini, meski selanjutnya semua (kecuali satu) pejabat yang ditunjuk adalah perwira militer.⁷ Sekwilda membidangi urusan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek.¹⁷⁸ Kedudukan yang sama juga terdapat pada tingkat kabupaten.

Dewan Perwakilan Rakyat

154. Dewan Perwakilan Rakyat adalah bagian legislatif pada setiap tingkat pemerintahan di Indonesia. Lembaga ini terdapat di tingkat pusat (DPR), provinsi (DPRD Tingkat I), dan kabupaten (DPRD Tingkat II). Secara teoretis, ketua DPRD, bersama dengan gubernur, memegang kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi. Selama masa pendudukan di Timor-Leste, 80% jabatan di tiap perwakilan dikuasai tiga partai yang diizinkan negara.[†] ABRI secara otomatis mendapat jatah 20% kursi.

155. DPRD pertama di Timor-Leste dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. I/AD, 1976 tertanggal 4 Agustus 1976 dengan Guilherme Gonçalves sebagai ketuanya. Lembaga ini mempunyai 30 anggota, tidak ada satu pun yang dipilih. DPRD Tingkat II juga dibentuk. Mantan Wakil Bupati Viqueque, Armindo Soares Mariano, berkata kepada Komisi bahwa satu-satunya kriteria menjadi anggota DPR pada awal 1976 itu adalah penunjukan dan persetujuan dari Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida),^{*} yang terdiri atas pemerintah dan komandan militer tingkat kabupaten. Ia menambahkan:

Pada waktu itu, mereka [Muspida] langsung mengangkat para anggota karena belum ada lembaga DPR, tidak ada juga pemilu. Di Tingkat II pun anggotanya ditunjuk. Memang ada lembaga DPR di sana tapi mereka itu hanya ditunjuk... semua... orang anu berasal dari desa anu dan kecamatan anu. Misalnya DPR di Viqueque pada waktu itu memerlukan 20 orang, jadi 20 orang ini diambil masing-masing empat orang dari lima kecamatan, dan mereka adalah tokoh-tokoh nonformal, liurai atau anak liurai yang agak menonjol, mereka itulah yang ditunjuk lalu duduk di sana.¹⁷⁹

156. Tidak ada catatan bahwa DPRD memberikan perhatian terhadap nasib rakyat Timor-Leste selama bencana kelaparan antara 1979 – 1980.¹⁸⁰ Bagaimana pun, pada 1981, eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pejabat Indonesia di Timor-Leste memberikan inspirasi kepada anggota DPRD setempat untuk menulis surat keluhan

^{*} Sekretaris Wilayah Daerah di Timor Timur adalah: Jose Bonifacio dos Reis Araújo (1976), J.R. Sinaga (ABRI), A.P. Kalangi (ABRI), Drs. Saridjo (ABRI), Antonio Freitas Parada, J. Hariwibowo (ABRI), Drs. Radjagarina Brahmana (ABRI).

[†] Golkar (Golongan Karya), PDI (Partai Demokrasi Indonesia), dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

[‡] Muspida secara teoretis adalah mekanisme konsultasi untuk melakukan koordinasi antara pemerintahan sipil dan komando teritorial militer dan kepolisian. Dalam praktiknya, muspida didominasi oleh militer.

kepada Presiden Soeharto.¹⁸¹ Surat protes anggota DPRD tersebut, ditandatangani oleh anggota paling tua dan yang paling muda, mengungkapkan kemuakan terhadap rezim ekonomi yang diciptakan oleh penguasa pendudukan dan akibatnya terhadap penduduk Timor-Leste:

Situasi ekonomi rakyat Timor Timur sedang melewati tahap yang paling tragis sejak permulaan perang saudara... Cukup banyak bantuan untuk membangun ekonomi yang telah diterima...tapi rakyat Timor Timur belum merasakan manfaat dari produksi komoditas pertanian mereka seperti kopi, cendana, kemiri, kayu, tembaga, dan hasil bumi lainnya. PT Denok adalah perusahaan khusus yang berlokasi di Timor Timur untuk menyerap seluruh hasil ekonomi provinsi dengan imbalan jasa bagi Pemerintah Indonesia... Lima tahun setelah integrasi, sebagian besar penduduk belum bisa menikmati kondisi hidup yang layak.¹⁸²

157. Laporan ini juga menyesalkan penyalahgunaan dana pembangunan oleh pejabat militer yang menduduki posisi tinggi di pemerintahan sipil. Surat tersebut menuduh Sekwilda, Kolonel AP (Paul) Kalangi, serta wakilnya, Kapten A. Azis Hasyam, telah menyelewengkan dana pembangunan yang dialokasikan langsung dari pemerintah pusat di Jakarta. Para anggota Dewan mengklaim mengetahui pengeluaran belanja “ratusan juta rupiah” yang mereka temukan “terang-terangan fiktif”. Surat itu juga menyatakan bahwa bantuan obat-obatan yang dikirim banyak ditemukan di toko-toko di Dili, sementara itu rumah sakit justru mengalami kekurangan persediaan obat-obatan. Akhirnya, anggota Dewan juga mengeluhkan bahwa untuk mendapatkan kerja di pemerintahan provinsi—lembaga yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Timor-Leste—seorang pelamar harus menjadi warga negara Indonesia. Pekerjaan pegawai negeri hanya tersedia bagi mereka yang mendukung pendudukan. Salah satu indikasi bagaimana pihak militer menghadapi pernyataan penentangan, bahkan dalam bentuknya yang paling halus, adalah ditahannya anggota dewan yang menulis surat tersebut.¹⁸³

158. Pemilihan Umum diadakan setiap lima tahun di Indonesia. Pemilihan umum nasional yang pertama di Timor Timur diadakan pada 1982. Sebanyak 311.375 penduduk ikut memilih. Hasilnya benar-benar menipu dan pada awalnya menunjukkan lebih daripada 100 persen pemilih terdaftar memberikan suara mereka untuk partai pemerintah, yakni Golkar (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Sebagai hasil dari pemilihan umum, 36 orang memperoleh kursi di DPRD Tingkat I, sedangkan delapan orang mewakili Timor Timur di DPR Pusat. Pada tahun-tahun kemudian, tingkat pluralisme meningkat, dalam batasan yang dikontrol ketat oleh Orde Baru. Pada 1995, kursi DPRD Tingkat I Timor Timur bertambah menjadi 45. Pada pemilihan umum tahun itu, Golkar memenangi 20 kursi; PDI, lima; PPP, dua; sementara ABRI memperoleh jatah sembilan kursi.

.....
* Diskriminasi sistemik dalam perekrutan pegawai ini sama dengan persyaratan zaman Orde Baru, saat semua pegawai harus menjadi anggota Golkar yang telah bersumpah untuk melindungi ideologi Pancasila.

Tabel 4: Komposisi anggota DPR Provinsi Timor Timur berdasarkan fraksi, 1980-1997

| Tahun | Fraksi PPP | Fraksi Golkar | Fraksi PDI | Fraksi ABRI | Fraksi non-ABRI | Total Anggota DPR |
|-------|------------|---------------|------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 1980 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1981 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1982* | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| 1987* | 0 | 34 | 2 | 9 | 0 | 45 |
| 1988 | 0 | 34 | 2 | 9 | 0 | 45 |
| 1989 | 0 | 33 | 2 | 9 | 0 | 44 |
| 1990 | 0 | 34 | 2 | 9 | 0 | 45 |
| 1991 | 0 | 34 | 2 | 9 | 0 | 45 |
| 1992* | 2 | 29 | 5 | 9 | 0 | 45 |
| 1997* | 1 | 30 | 5 | 9 | 0 | 45 |

*Tahun Pemilu.

Sumber: DPRD Tingkat I Timor Timur

Lembaga Administrasi Pemerintah: program nasional di tingkat provinsi

159. Pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru sangat tersentralisasi. Sebagian besar keputusan kebijakan diambil di Jakarta sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional terstruktur. Ketika itu, Indonesia menerapkan Repelita sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal dan pembangunan. Para menteri yang berkantor di Jakarta, departemen, dan biro pemerintah menerapkan kebijakan tersebut melalui kantor-kantor mereka yang berada di tingkat provinsi. Diperlukan waktu beberapa tahun sebelum struktur ini dapat beroperasi di Timor Timur karena fokus utama Indonesia adalah operasi militer. Selain itu, Indonesia perlu merekrut dan melatih pejabat pemerintah. Sejak awal, Timor Timur dikendalikan oleh militer. Pada tahun-tahun awal pendudukan, tidak seperti wilayah lain di Indonesia, Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) membentuk tim yang secara langsung memerintah Timor Timur. Timor Timur diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri pada 1978, yang membuat terbentuknya sistem pemerintahan yang setara dengan praktik pemerintahan Indonesia pada umumnya.* Namun, militer tetap memegang kontrol utama atas pemerintahan. Militer memegang posisi kunci

* Bahkan setelah disetarakan dengan praktik pemerintahan yang biasa di Indonesia, Timor Timur tetap merupakan kasus yang bersifat khusus. Timor Timur mendapatkan anggaran khusus langsung dari pemerintah pusat. Di samping itu, Timor Timur juga menerima dana khusus yang cukup besar melalui Instruksi Presiden (Inpres). Selain itu, anggaran nasional memiliki jalur anggaran khusus bagi Timor Timur (butir anggaran 16).

dalam pemerintahan sipil dan punya wewenang veto atas penunjukan jabatan. Ini memberinya kekuasaan besar, khususnya atas perekonomian provinsi, tetapi juga atas penyusunan kebijakan lokal.

160. Begitu integrasi secara resmi terjadi pada Juli 1976, militer Indonesia mulai memberlakukan standar-standar sesuai dengan yang berlaku dalam struktur Indonesia. Pada 14 Agustus 1976, Menteri Pertahanan dan Keamanan menjadikan Timor Timur sebagai daerah operasi militer dalam negeri dengan mendirikan Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan Timor Timur (Kodahankam Timor Timur) yang beroperasi di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan.¹⁸⁴ Dokumen kementerian menyebutkan bahwa:

Komando Daerah Pertahanan Keamanan Timor Timur dibentuk dengan maksud untuk membangun landasan bagi Pembinaan dan Pengembangan Pertahanan dan Keamanan di Timor Timur selama “masa transisi” sampai akhir Repelita Kedua [April 1979], serta untuk menjalankan Pembinaan dan Pengembangan Pertahanan dan Keamanan Nasional.¹⁸⁵

161. Subbagian mengenai ABRI pada Bagian 4 ini telah membahas proses ini secara lebih terperinci. Pada dasarnya, militer membentuk struktur teritorial yang memperkenalkan sistem pos-pos dan komando militer serta polisi, yang sejajar dengan pemerintahan sipil sampai tingkat desa.

162. Dalam kurun beberapa tahun pertama pendudukan Indonesia, Jakarta memerintah Timor-Leste secara langsung. Pada 1976 – 1977, Tim Koordinasi Pusat Pendidikan dan Kebudayaan diberikan tanggung jawab atas program dan koordinasi pendidikan. Hal itu mencerminkan fokus awal rezim pendudukan pada pelatihan bahasa, agar orang Timor-Leste dapat berasimilasi dengan negara Indonesia.¹⁸⁶ Di Timor-Leste, tim ini bekerja melalui Tim Pendamping Pendidikan dan Kebudayaan.

163. Pada 1978, tim yang lebih besar dibentuk untuk menjalankan pemerintahan, yang dinamai Tim Pelaksana Pembangunan Pusat, TPPP. Pelaksananya terdiri atas personel dari lembaga pemerintah di Jakarta, yang diketuai oleh Jenderal Benny Moerdani. Tim ini bekerja melalui Tim Pelaksana Pembangunan Daerah atau TPPD, yang secara formal diketuai oleh gubernur tapi sebenarnya di bawah kendali Kolonel Kalangi, yang saat itu menjabat sekwilda.¹⁸⁷ Kebanyakan sektor pemerintahan, seperti keamanan dan ketertiban, politik, informasi, komunikasi, pengendalian jumlah penduduk dan perumahan, tenaga kerja, PKK, dan kegiatan keagamaan, langsung berada di bawah pengawasan langsung TPPP Jakarta. Pemerintahan setempat bertanggung jawab hanya atas lima sektor: pendidikan dasar, kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, dan kesejahteraan sosial.¹⁸⁸

164. Setelah 1978, ketika kendali pemerintahan Timor Timur secara resmi diserahkan dari Departemen Pertahanan kepada Menteri Dalam Negeri, Indonesia mendirikan lebih banyak kantor-kantor pemerintah. Fokusnya adalah pada

pendidikan dan informasi publik. Kantor pemerintah yang pertama kali beroperasi adalah kantor pendidikan dasar, yang dibuka pada 1978. Selain bahasa, fokus awal yang lain adalah informasi, dan pada 1978 Departemen Penerangan Timor Timur memasang pemancar televisi di Marabia, di perbukitan ke arah selatan dekat kota Dili. Departemen ini membagikan pesawat televisi ke seluruh Timor-Leste untuk memastikan bahwa siaran langsung dapat ditonton.¹⁸⁹

165. Pada akhir 1970, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai berfungsi. Lembaga ini memusatkan diri pada infrastruktur, bangunan sekolah dasar, dan sekolah keguruan. Pada 1979, Departemen Pendidikan terbentuk, sebagai proses yang terpisah dengan pembentukan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Timor Timur.¹⁹⁰ Ketika Pelita ketiga dimulai pada April 1979, sebagian Timor Timur dimasukkan dalam mekanisme perencanaan nasional. Pada permulaan Pelita keempat, pada 1984, Timor Timur menjadi bagian yang tak dipisahkan dari perencanaan dan penerapan kebijakan nasional Indonesia.

166. Pada awal 1980-an, Indonesia mengembangkan struktur pemerintahan yang baku di Timor-Leste. Indonesia membentuk tiga kantor yang biasanya berada di tingkat provinsi. Yang pertama dari tiga kantor ini adalah Kantor Wilayah (Kanwil). Kantor Wilayah merupakan kantor penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, terintegrasi secara vertikal dengan kantor pusat, dan bertanggung jawab untuk penerapan kebijakan secara langsung, misalnya kebijakan perpajakan dan industri.¹⁹¹ Di Timor-Leste, kantor-kantor ini kebanyakan dikepalai oleh pejabat militer yang diperbantukan pada pemerintah sipil (dikaryakan),[†] dan kebanyakan stafnya berasal dari luar Timor-Leste.¹⁹² Di antara kantor dinas yang berkuasa adalah Bappeda. Sebagai titik koordinasi utama untuk proyek-proyek pemerintah, Bappeda mengalokasikan proyek “basah” kepada pengusaha, militer, serta pejabat pemerintah.¹⁹³

167. Kelompok kantor administrasi yang lain adalah satuan pemerintah yang disebut dinas,[‡] yang sebagian juga memiliki kantor di tingkat kabupaten. Untuk kantor dinas, proporsi staf yang berasal dari Timor-Leste adalah lebih tinggi,

* Kanwil “vertikal” serta lembaga lain di bawah menteri-menteri kabinet nasional mencakup Pertambangan dan Energi, Pertanian, Koperasi, Pendidikan dan Kebudayaan, Industri, Transmigrasi, Perdagangan, Kesehatan, Kehutanan, Perhubungan, Informasi, Pekerjaan Umum, Sosial, Ketenagakerjaan, Pembangunan Perdesaan, BP7, dan BKKBN. Cabang lain termasuk Dolog, Bappeda, Inspektorat Provinsi, Badan Pusat Statistik, serta Sospol.

† Pegawai yang dikaryakan adalah perwira militer aktif yang diperbantukan untuk tugas administrasi sebagai bagian dari doktrin dwifungsi ABRI yang memberinya peran dalam bidang politik dan pembangunan serta pertahanan. Lihat pembahasan bagian militerisasi masyarakat Timor Leste pada segmen 4.3 di atas. Pada akhir masa pendudukan, pegawai yang dikaryakan mengisi 140 posisi kunci di pemerintahan Timor Timur, termasuk 19 pemimpin kantor administrasi di tingkat provinsi, wakil gubernur, dan dua posisi asisten gubernur. Sekwilda, kepala bidang sospol (Kakansospol), dan ketua Bappeda semuanya berasal dari militer. Di tingkat kabupaten, mereka mengontrol 64 posisi, termasuk tiga dari 13 posisi bupati. Lihat dokumen militer yang disita pada 1998, “Rekapitulasi Karyawan ABRI yang bertugas di eksekutif + legislatif”, hal 16 dan 17.

‡ Dinas termasuk Pertanian, Peternakan, Pendidikan dan Kebudayaan, Perikanan, Kehutanan, Perpajakan Daerah, Pertambangan, Perkebunan, Kesehatan Publik, Pekerjaan Umum, Sosial, dan Pariwisata.

kadang-kadang mencapai 60%.¹⁹⁴ Meskipun pemerintah daerah tingkat provinsi bertanggung jawab atas satuan-satuan operasional ini, tumpang-tindih yang luas di antara kanwil dan dinas berakibat bahwa pemerintahan lokal tidak lain adalah “perpanjangan pemerintahan pusat”.¹⁹⁵

Pemerintah kabupaten dan kecamatan

168. Pemerintah kabupaten dikepalai oleh bupati. Bupati diangkat oleh gubernur. Bupati bertanggung jawab atas pemerintahan kabupaten serta bertanggung jawab melakukan koordinasi atas semua kecamatan yang berada di bawah wilayah kabupaten bersangkutan. Permukiman penduduk di Timor-Leste yang jarang, ditambah lagi dengan banyaknya pembagian pemerintah kabupaten dan kecamatan, berarti bahwa provinsi ini diatur secara berlebihan.

169. Administrasi pemerintah di tingkat kabupaten terutama terdiri atas kantor-kantor dinas; misalnya, ada kantor dinas untuk administrasi tenaga kerja, layanan publik, dan infrastruktur. Segala sesuatunya dikoordinasikan dan diterapkan melalui provinsi. Di antara kantor dinas di tingkat kabupaten, proporsi pegawai yang berasal dari Timor-Leste relatif tinggi, sekitar 60 persen, namun kebanyakan dari mereka adalah pegawai golongan rendah.¹⁹⁶ Setelah Timor Timur dibagi menjadi tiga daerah administrasi pada 1987, seorang asisten gubernur ditugaskan untuk setiap daerah, untuk kemudian melakukan koordinasi atas semua bupati.

170. Pada tahun-tahun awal pendudukan, sangat sedikit jumlah calon yang memiliki kualifikasi untuk jabatan layanan publik, dan hal ini memengaruhi pengangkatan pada banyak posisi. Laporan yang dibuat oleh mantan bupati Lautém pada tahun-tahun awal pendudukan menunjukkan kesulitan yang dihadapi pihak militer dalam menjalankan administrasi:

Pegawai negeri dari zaman Portugal langsung diangkat. Harus ada persetujuan dari ABRI... Orang-orang di antara kami yang turun [dari gunung] lebih dahulu dan yang dulu adalah pegawai negeri juga langsung diangkat, apakah dia dulu Fretilin, Apodeti, atau UDT...pokoknya angkat...Tapi tiap-tiap kecamatan ada camatnya. Staf-staf ada orang dari pusat untuk mendampingi kami. Mereka juga ABRI... Mereka membantu kami karena kami tidak tahu bahasa Indonesia.¹⁹⁷

171. Semua, kecuali satu, bupati pertama berasal dari, atau berhubungan dengan, partai politik Apodeti atau UDT. Sebagian, seperti Claudio Vieira, adalah mantan anggota Partisan. Pengangkatan tampaknya didasarkan pada campuran antara keputusan karena kebutuhan akan personel yang terampil, dan kepentingan militer untuk keperluan pengontrolan dan kepatuhan. Penunjukan penting yang lain, seperti untuk posisi sebagai camat, dilakukan oleh bupati bersama Muspida*—

* Pada tingkat kabupaten, Bupati, Danrem, dan Kapolres bertemu pada rapat Muspida.

Musyawarah Pimpinan Daerah.¹⁹⁸ Mantan Wakil Bupati Viqueque, Armindo Soares Mariano, menjelaskan prosedur tersebut kepada Komisi:

Memang dari Tingkat II yaitu Bupati bersama Muspida, yang mengusulkannya. Pada waktu itu kan tidak ada hal semacam itu, dan hanya meminta kepada Bupati dan kriterianya itu adalah bahwa orang ini siapa-siapa. Jadi dari Bupati yang mengusulkannya, dan usulannya itu dari Bupati kemudian ditandatangani oleh Dandim sebagai Ketua Muspida dan Bupati juga ikut menandatangani. Setelah itu dikirim ke tingkat provinsi, jadi setelah itu turun SK Gubernur.¹⁹⁹

172. Selama masa pendudukan Indonesia, militer mengisi beberapa kali jabatan bupati, meskipun orang Timor-Leste cenderung ditunjuk menduduki posisi itu, seperti halnya dengan gubernur.

**Tabel 5: Bupati berdasarkan asal-usul dan afiliasi,
1976 – 1999**

| Distrik | Tanggal | Bupati | Partai | Asal | Kebangsaan |
|---------|-----------------|--------------------------|---------|----------|------------|
| Aileu | Mei 1976 – 1989 | Abel Dos Santos F. | UDT | - | Timor |
| | 1989 – 1994 | Fernão Verdial | - | Ainaro | Timor |
| | 1994 | Waluyo | ABRI | - | Indonesia |
| | 1994 – 1999 | Suprpto Tarman | ABRI | - | Indonesia |
| Ainaro | Mei 1976 – 1984 | Moises Da Silva Barros | Apodeti | Ainaro | Timor |
| | | Letkol. H Hutagalung | ABRI | - | Indonesia |
| | | José A B dos Reis Araújo | Apodeti | Ainaro | Timor |
| | 1994 – 1999 | Norberto de Araújo | Apodeti | Ainaro | Timor |
| | 1999 | Evaristo D. Sarmiento | UDT | Maubisse | Timor |
| Ambeno | Mei 1976 – 1984 | Jaime dos R de Oliveira | UDT | Same | Timor |

| | | | | | |
|----------|--------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|
| | 1984 – 1989 | Letkol. Imam Sujuti | ABRI | - | Indonesia |
| | 1994 – 1999 | Vicente Tilman PD Filomeno Mesquita | Apodeti Apodeti | Viqueque Ambeno | Timor Timor |
| Baucau | Mei 1976 – 1982 | Abel da Costa Belo | Apodeti | Baucau | Timor |
| | 1982 – 1987 | Kol. I Gusti Ngurah O. | ABRI | - | Indonesia |
| | 1987 – 1992 | Drs. Herman Sediono | ABRI | - | Indonesia |
| | 1992 – 1999 | Virgilio Dias Marçal | UDT | Baucau | Timor |
| Bobonaro | Mei 1976 – 1984 | João Da Costa Tavares | UDT | Bobonaro | Timor |
| | 1984 – 1989 | João Da Costa Tavares | UDT | Bobonaro | Timor |
| | 1989 – 1992(?) | Mariano Lopes da Cruz | UDT | Manatuto | Timor |
| | 1992(?) – 1999 | Guilherme dos Santos | UDT | Bobonaro | Timor |
| Covalima | Mei 1977 – c. 1981 | Américo da Costa Nunes | Apodeti | Bobonaro | Timor |
| | c. 1981 – 1989 | Rui Emiliano T Lopes | UDT | Suai | Timor |
| | | Rui Emiliano T Lopes | UDT | Suai | Timor |
| | 1994 – 1999 | Drs. Herman Sediono | ABRI | - | Indonesia |
| Dili | Mei 1976 – 1984 | Mario Sanches da Costa | eks-Fretilin | Laleia | Timor |
| | 1984 – 1989 | Raimundo Sarmiento | UDT | Manatuto | Timor |
| | | Armindo Soares Mariano | Apodeti | Viqueque | Timor |
| | 1994 – 1999 | Domingos MD Soares | - | Manatuto | Timor |

| | | | | | |
|----------|-----------------|--|-----------------|----------------------|--------------------|
| Ermera | Mei 1976 - 1984 | Tomas Aquino Gonçalves | Apodeti | Atsabae | Timor |
| | 1984-1989 | Tomas Aquino Gonçalves | Apodeti | Atsabae | Timor |
| | 1994-1999 | Letkol. Inf. Hidayat Constantino Soares | ABRI - | - Ermera | Indonesia Timor |
| Liquiça | Mei 1977-1984 | Francisco dos Santos Ribeiro | Apodeti | Liquiça | Timor |
| | 1984 – 1989 | Jaime Remedios de Oliveira | UDT | Same | Timor |
| | 1994 – 1999 | Gaspar Sarmento Leoneto Martins | UDT Apodeti | Liquiça Maubara | Timor Timor |
| Lautém | Mei 1976 – 1985 | Claudio Vieira | Apodeti | Moro | Timor |
| | 1985 – 1990 | Letkol. Hendrikus | ABRI | - | Indonesia |
| | 1990 – 1995 | José Valente | Fretilin | Lore | Timor |
| | 1995 – 1999 | Edmundo Conceição Da Silva | Apodeti | Moro | Timor |
| Manatuto | Mei 1976 – 1984 | Luis Maria da Silva | Fretilin | Manatuto | Timor |
| | 1984 – 1989 | Elias Enes Carceres Abilio José Osorio | Kota Apodeti | Manatuto Laclubar | Timor Timor |
| | 1994 – 1999 | Soares Vidal Doutel Sarmento | Apodeti | Manatuto | Timor |
| Manufahi | Mei 1976 – 1984 | Alexandrino Borromeo | Apodeti | Manufahi | Timor |
| | 1984 – 1989 | Tomas Correia Nazario Andrade | UDT UDT | Manatuto Manatuto | Timor Timor |
| | 1995 – 1999 | Nazario Andrade | UDT | Manatuto | Timor |
| Viqueque | Mei 1976 – 1984 | Jaime dos Santos Carvalho | Apodeti | Viqueque | Timor |
| | 1984 – 1989 | Mayor Syarif Hidayat | ABRI | - | Indonesia |
| | 1989 – 1994 | Y. Hendro S. | ABRI | - | Indonesia |
| | 1995 – 1999 | I Ketut Lunca | ABRI | - | Indonesia |
| | 1999 | Martinho Fernandes | Apodeti | Viqueque | Timor |

Sumber: CAVR

Pemerintah tingkat desa

173. Desa-desa di Indonesia diperintah oleh seorang kepala desa, yang berkoordinasi dengan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pada zaman Portugis berkuasa, desa (*suco*) di Timor-Leste sering diperintah oleh *liurai* setempat. Pada masa pendudukan Indonesia, seperti halnya di sebagian besar daerah di Indonesia, pemimpin adat setempat sering merasa ditekan oleh negara.²⁰⁰

174. Setelah peristiwa pemindahan dan pemukiman penduduk secara besar-besaran antara 1978 dan awal dekade 1980, Indonesia mulai membangun perdesaan di Timor-Leste. Pada 1980, Pemerintah Indonesia membentuk LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 25, dan Indonesia menetapkan organisasi tersebut di Timor Timur pada 1982. Pengurus LKMD berasal dari desa, bertugas menjalankan tujuan pembangunan negara di tingkat desa.

175. Lembaga penting lain dari pemerintah desa adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. Ini merupakan koperasi para petani yang dimonopoli pemerintah untuk menjual hasil pertanian. Meskipun koperasi ini bertujuan meningkatkan pendapatan dan menjamin pasar, dalam praktiknya tujuan yang baik ini sering disalahgunakan oleh berbagai macam monopoli oleh pemerintah. Inilah masalah yang terjadi di Timor Timur, di mana KUD digunakan untuk membeli kopi dari petani dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasar, dan dari praktik ini monopoli kopi PT Denok yang didukung militer mendapat keuntungan yang sangat besar (lihat pembahasan mendalam di Bab 7.9: Hak ekonomi dan sosial). Pengamat ekonomi Indonesia, Profesor Mubyarto, memberikan komentar atas dampak praktik ini terhadap industri kopi dan kredibilitas pemerintah sipil di Timor Timur:

Stagnasi ekonomi kopi adalah terutama akibat pengaturan oleh monopoli swasta untuk membeli kopi melalui sistem resmi Koperasi Unit Desa (KUD). Di mata masyarakat, monopoli swasta yang bekerja melalui koperasi desa ini melemahkan kredibilitas pemerintah, khususnya berkenaan dengan kemampuannya (atau bahkan integritasnya) dalam pembangunan perdesaan.²⁰¹

176. Para komandan militer dan pejabat tinggi pemerintah seperti gubernur diuntungkan karena kontrol mereka terhadap industri kopi. Mantan gubernur, Mario Carrascalão, telah menjelaskan tentang pembagian keuntungan yang besar di atas kerugian para petani Timor-Leste, dan bagaimana dana 'komisi kopi' dibagi antara militer di tingkat kabupaten dan provinsi serta pejabat sipil—gubernur, jaksa, pemimpin militer, dan yang lain.²⁰²

177. Pada 1984, program pembangunan yang dijalankan oleh militer yang disebut 'ABRI Masuk Desa' atau AMD diluncurkan.²⁰³ ABRI berpendapat hal itu merupakan sumbangan berharga bagi pembangunan desa oleh pasukan teritorial, sedangkan kritik atas program tersebut menganggap bahwa program ini merupakan cara lain bagi militer untuk tetap dapat melakukan pengawasan terhadap warga.

178. Tingkat kontrol oleh militer atas pemerintah dan ekonomi setempat, dan juga masalah keamanan, mengakibatkan banyak orang Timor-Leste sangat menderita, termasuk sebagian orang yang pada mulanya mendukung intervensi dan pendudukan oleh Indonesia. Tim ekonomi Indonesia menjelaskan dampak militer atas perekonomian provinsi:

Karena campurtangan militer yang besar dalam urusan ekonomi dan pembangunan, penduduk setempat cenderung tidak menghormati mereka. Bahkan di antara kalangan elite Timor Timur ada yang begitu membenci militer karena mereka bertanggung jawab atas stagnasi ekonomi wilayah tersebut.²⁰⁴

Layanan sipil

179. Indonesia membangun angkatan pegawai negeri yang besar di Timor Timur, yang bila dibandingkan dengan angkatan pegawai negeri nasional, ukuran relatifnya terhadap jumlah penduduk nyaris dua kali lebih besar.* Pada 1981, terdapat 780 pegawai negeri. Pada 1997, terdapat lebih daripada 33.602 pegawai negeri.²⁰⁵ Dari jumlah ini, 18.000 orang bekerja di ibukota kabupaten, dan sisanya sebanyak 15.300 bekerja di Dili. Banyak di antara mereka adalah guru dan pegawai kesehatan. Banyak pegawai negeri di Timor Timur direkrut dari wilayah lain di Indonesia. Mereka pada umumnya memegang posisi yang lebih penting dibandingkan dengan rekan Timor-Leste mereka. Pelamar kerja yang berasal dari Timor-Leste untuk jabatan pemerintahan harus menunjukkan bukti sebagai warga negara Indonesia. Mereka pada umumnya diperlakukan dengan penuh kecurigaan dan selalu harus melewati saringan untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada negara Indonesia dan doktrinnya, Pancasila. Divisi khusus ABRI yang dikenal dengan sebutan Komando Taktis (Kotis) bertugas melakukan penyaringan.† Kecurigaan mendalam terhadap personel dari Timor-Leste, yang ditunjukkan dengan adanya proses ini, merupakan faktor penghambat bagi para personel Timor-Leste ini untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi sebagai pegawai negeri.²⁰⁶

180. Pemerintahan sipil Indonesia di Timor Timur, hampir selama seluruh periode pendudukan, sangat tunduk pada pemerintah militer dan strukturnya. Militer mendominasi semua aspek pemerintahan pada tahun-tahun awal pendudukan

* Pegawai negeri sipil sebanyak 3,09 persen dari penduduk, dengan 2,12 persen di tingkat nasional. [Badan Pusat Statistik, *Timor Timur Dalam Angka*, Dili, 1993.]

† Pegawai Kotis dapat ditemukan di setiap tingkat struktur komando militer dan bertanggung jawab atas intelijen harian dan pengawasan penduduk. Pada akhir 1970-an, mereka bertugas untuk melakukan penyaringan terhadap warga yang turun dari pergunungan. Setiap orang yang akan mengajukan izin kerja, izin perjalanan, KTP, atau bahkan surat nikah, mula-mula harus mengisi 15 halaman pertanyaan di depan pegawai Kotis. Pertanyaan yang diajukan mencakup kehidupan pribadi individu secara terperinci dan silsilah keturunan, juga mencakup afiliasi politik seseorang, sikap dan reaksi mereka terhadap gerakan bersenjata UDT pada Agustus 1975, invasi Indonesia pada Desember 1975, integrasi, Fretilin, dan lain-lain. Jawabannya mengikat secara hukum, dan pernyataan yang "salah" dapat dikenakan hukuman.

ketika pembungkaman terhadap resistansi merupakan prioritas utama dan operasi militer penuh ketika itu sedang dijalankan. Ketika situasi ini mengendur pada akhir dekade 1970, militer gagal menghancurkan resistansi bersenjata secara total, dan obsesinya untuk mengontrol warga sipil berakibat pada timbulnya penguasaan struktur pemerintah militer di segala bidang hingga di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, personel militer memegang jabatan kunci dalam pemerintah sipil itu sendiri. Banyak pejabat yang menggunakan jabatan ini untuk keuntungan mereka pribadi. Hasilnya adalah pemerintahan ganda, pemerintahan yang berlebihan, dan dampak yang menindas terhadap ekonomi dan pembangunan. Pemerintah sipil juga dikorbkan karena kedekatannya dengan ABRI.

181. Rezim Orde Baru membuat proses pemerintahan sangat tersentralisasi, yang berarti bahwa provinsi yang jauh seperti Timor Timur jauh dari pengambilan kebijakan dan kurang memiliki kekuasaan atas masa depan mereka sendiri. Hal ini diperburuk oleh konteks militer dari konflik di daerah ini. Rezim ini juga memolitisasi pemerintah sipil, dan hal ini terjadi lebih kuat lagi dalam konteks Timor Timur, di mana warga Timor-Leste dengan latar belakang prointegrasi lebih disukai dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap warga Timor-Leste oleh pihak penguasa Indonesia berakibat pada jatah posisi—khususnya posisi senior—dalam pemerintahan sipil yang didominasi oleh warga Indonesia yang dikirim ke wilayah ini.

182. Pemerintahan sipil di Timor-Leste benar-benar lemah dan kurang memiliki integritas. Dalam konteks konflik yang terus-menerus dan masyarakat yang sangat termiliterisasi selama duapuluh-empat tahun pendudukan Indonesia, efektivitasnya sebagai institusi sipil yang profesional yang memberikan pelayanan kepada rakyat di daerah tersebut jelas terbatas. Hal ini dengan sendirinya menghalangi perlindungan dan peningkatan hak asasi manusia warga Timor-Leste.

183. Lagipula, pada akhir 1998 dan selama 1999, pelayanan publik Indonesia terpolitisasi secara mendalam dalam hal persoalan penentuan nasib sendiri, baik sebelum maupun setelah penandatanganan Kesepakatan 5 Mei. Anggaran pemerintah dipakai untuk mendukung kampanye pro-otonomi, termasuk disalurkan kepada kegiatan milisi-milisi (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

Catatan akhir

1. Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984, hal. 7-17; James Dunn, *East Timor: Rough Passage to Independence*, Longueville Books, NSW, 2003, hal. 254; Robert Lowry, *The Armed Forces of Indonesia*, Allen and Unwin, St. Leonards, NSW, 1996, hal. 315-316.
2. Sebagian besar informasi di bagian ini diambil dari Ulf Sundhaussen, *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*, Oxford University Press, Oxford, 1982, hal. 1-50.
3. Ian MacFarling, *The Dual Function of the Indonesian Armed Forces*, Australian Defence Studies Center, University of New South Wales, NSW, 1996, hal. 114.

4. Robert Cribb. (2001). "How Many Deaths? Problems in the statistics of massacre in Indonesia (1965-1966) and East Timor (1975-1980)". dalam *Violence in Indonesia*. Ingrid Wessel dan Georgia (peny.). Wimh fer. Hamburg, Abera: 2001, hal: 82-98.
5. Dunn, hal. 159.
6. Lowry, hal. 135.
7. Macfarling, hal. 87.
8. Lowry, hal. 20.
9. Ibid, hal. 94.
10. Ibid, hal. 110.
11. Ulf Sundhaussen, "The Inner Contradiction of the Suharto Regime: A starting point for a withdrawal to the barracks" dalam David Bourchier dan John Legge (ed.), *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, Centre for Southeast Asian Studies Monash University, Victoria, 1994, hal. 277-278.
12. Harold Crouch, "The Trend to Authoritarianism: The Post-1945 Period" dalam Harry Aveling (ed.), *The Development of Indonesian Society*, University of Queensland Press, St. Lucia, 1979, hal. 197.
13. Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, 1978. hal. 274.
14. Crouch, hal. 280.
15. *Department of State Annual Report on Military Expenditures, 1998*, Submitted to the Committee on Appropriations of the U.S. Senate and the Committee on Appropriations of the U.S. House of Representatives by the Department of State on February 19, 1999.
16. Douglas Kammen, "Notes on the Transformation of East Timor Military Command and Its Implications for Indonesia", *Indonesia* 67, April 1999, Cornell University South East Asia Program (SEAP), Ithaca, hal. 64; Lowry, hal. 23
17. Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, hal. 273.
18. Macfarling, hal. 100.
19. Ibid, hal. 130.
20. Ibid, hal. 145.
21. Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, hal. 275-77.
22. Kesaksian Jusuf Wanandi pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri serta Komunitas Internasional , 15-17 Maret 2004; Lihat juga laporan ini mengenai hak ekonomi dan sosial.
23. Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, hal. 299.
24. Ibid, hal. 300.
25. Lowry, hal. 47-48.
26. Arnold C Brackman, *Indonesia: Suharto's Road*, American-Asian Educational Exchange, 1973, hal. 29.
27. Macfarling, hal. 139.
28. Ibid, hal. 92.
29. Kepres 19/1969, 3 Maret, dikutip dalam Macfarling, hal. 92.
30. Lowry, hal. 70-72.
31. Ken Conboy, *Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces*, Equinox Publishing, Jakarta, 2003, hal. 197.
32. Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Markas Besar TNI, *Sejarah TNI Jilid IV (1966-1983)*, Jakarta, 2000, hal. 145; Conboy, hal. 199
33. Surat Keputusan Menhankam/Pangab Skep/1063/VIII/1975, yang ditandatangani oleh Jenderal M. Panggabean.
34. Surat Keputusan Menhankam/Pangab Skep/1063/VIII/1975.
35. Ibid.
36. Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor. KEP/03/II/1977 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Daerah Pertahanan-Keamanan Timor Timur (Kodahankam Tim-Tim, 18 Februari 1977.
37. Surat Keputusan Menhankam/Pangab dan Mendagri, Nomor KEP/35/X/1976 – Nomor 261, Tahun 1976 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Staf Koordinasi Kewilayahan Provinsi Timor-Timur, 26 Oktober 1976.
38. Telegram Menhankam/Pangab Nomor: STR/969/1978 tertanggal 11 September 1978 tentang Persiapan Likwidasi [sic] Kodahankam Tim-Tim.

39. Jiwa Atmadja, *TNI Kembali ke Jatidiri: Profesionalisme Kodam IX/Udayana*, Penerbit Tabloid Mingguan Taksu, Denpasar, 2000, hal. 65.
40. Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Nomor. Kep/23/X/1978 tentang Normalisasi Penyelenggaraan Pertahanan-Keamanan di Daerah Timor Timur dan pembubaran Kodahankam Tim-Tim, 12 Oktober 1978.
41. *Kolakops Timor-Timur Dalam Gambar dan Peristiwa Tahun 1992-1993*, Dili: tanpa penerbit, 1993, hal. 182.
42. Tapol, Occasional Report No. 26, Oct 98, "East Timor under the Indonesian Jackboot, An Analysis of Indonesian Army Documents" <http://tapol.gn.apc.org/reports/ REAST.htm>, diunduh pada 18 Juni 2005
43. Dokumen yang dikirim oleh Komandan Korem (Danrem) 164/Wiradarma kepada Komandan Kodim (Dandim) nomor 1627 sampai dengan 1639: TR Dan Kolak Ops No: TR/661/IX/1983 28 September 1983, seperti dapat dibaca, misalnya, dalam berkas pengadilan terhadap David Dias Ximenes (No. 22/PID/B/84/PN.DIL).
44. Departemen Pertahanan dan Keamanan, Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak/01/IV/1979 tentang Kegiatan Bidang Operasi Tempur Tahun 1979-1980, 23 April 1979.
45. Surat Keputusan Pangab Nomor Kep/17/P/IX/1984, 19 September, 1984, dikutip dalam 35 Tahun Dharma Bakti Kostrad , hal. 84.
46. *35 Tahun Darma Bakti Kostrad* [tidak ada informasi penerbitan], hal. 91.
47. Douglas Kammen, "Notes on the Transformation of the East Timor Military Command and its Implications for Indonesia," *Indonesia* 73, April 2002, hal. 61-76.
48. Kepala Tim Analisis Intelijen kepada Panglima Kolakops, Memo Intelijen nomor R/63/MI/VIII/1992, tertanggal 11 Agustus 1992, yang dikutip dalam Samuel Moore, "The Indonesian Military's Last Years in East Timor. An Analysis of Its Secret Documents," *Indonesia* 72, October 2001, Cornell University South East Asia Program, (SEAP), Ithaca, hal. 28-29.
49. Moore, hal. 28.
50. Ibid, hal. 26-29.
51. Tapol, Occasional Report No. 26.
52. Douglas Kammen, "The Trouble with Normal: The Indonesian Military, Paramilitaries and the Trial in East Timor", dalam *Violence and the State in Suharto's Indonesia*, Benedict R.OG Anderson South East Asia Program, Cornell University, South East Asia Program (SEAP), Ithaca, NL 2001, hal. 11.
53. Komando Daerah Militer IX/Udayana, Komando Resort Militer 164, Rekapitulasi Kekuatan Personil Organik dan Penugasan Posisi, November 1997; Komando Daerah Militer IX/Udayana, Komando Resort Militer 164, Rekapitulasi Kekuatan Personil Organik dan Penugasan, Juli 1998.
54. Tapol, Occasional Report No. 26.
55. Ibid.
56. Catriona Drew, "The East Timor Story: International Law on Trial", *European Journal of International Law*, 1990-2004, Academy of European Law, New York.
57. Surat Menhankam/Panglima TNI kepada Presiden RI tentang Perkembangan Lanjut Situasi Timtim dan Saran Kebijakan Penanganannya, No. R/511/P-01/03/14 Set, ditandatangani oleh Jenderal Wiranto, tertanggal 6 September 1999.
58. Petunjuk Panglima TNI, No. 02/P/IX/1999, yang ditandatangani oleh Jenderal Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tanpa tanggal tapi tampaknya dikeluarkan pada 6 September September 6.
59. Surat 'R/544/P/IX/1999' yang ditandatangani Jenderal Wiranto, tertanggal 20 September 1999.
60. Tomas Goncalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
61. Pidato Uskup Belo saat penandatanganan Pact of National Unity, bertepatan dengan persiapan kampanye pemilihan umum 2001 untuk Constituent Assembly , Juli 2001, arsip Pendidikan Kewarganegaraan Timor-Leste UNDP.
62. Mario Carrascalão dan Tomas Gonçalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
63. José Ramos-Horta, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.

64. Xanana Gusmão, João Carrascalão, dan Mari Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
65. Mario Carrascalão dan Mari Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
66. Tomas Gonçalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003; wawancara dengan Tomas Gonçalves, Dili, 23 Oktober 2003.
67. Wawancara dengan Tomas Gonçalves, anggota pendiri Apodeti, Dili, 23 Oktober 2003; Conboy, *Kopassus*, hal. 206.
68. Pernyataan HRVD # 04599 dan 02491.
69. Wawancara SCU dengan Tomas Gonçalves, 8 Agustus 2000, hal. 4.
70. Wawancara SCU dengan Tomas Gonçalves, 8 Agustus 2000, hal. 5; Conboy, *Kopassus*, hal. 240.
71. Tomas Gonçalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
72. Pernyataan HRVD #01689; wawancara CAVR dengan Manuel de Oliveira, Alas, 19 Oktober, 2003.
73. Wawancara SCU dengan Tomas Gonçalves, 8 Agustus 2000, hal. 5; pernyataan HRVD nomor 01108-01; 01123-01; 01794-01; 04470-01; 02525-01; 06410-08; 01748-03; 05018-01; 03551-01.
74. Wawancara T.Sherman dengan João Viegas Carrascalão, 13 Maret 1996, hal. 128-129, 132.
75. Jill Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism*, St. Lucia, Queensland: University of Queensland Press, 1978, hal. 164; Helen Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*, Yayasan HAK & Sahe Institute for Liberation, Dili 2000, hal. 195.
76. Wawancara SCU dengan Tomas Gonçalves, 8.8.2000; Conboy, *Kopassus*, hal. 246.
77. Asvi Warman Adam, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2003.
78. Tomas Gonçalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
79. Wawancara CAVR dengan Manuel de Oliveira, Alas, 19 Oktober 2003; wawancara CAVR dengan Rui Lopes, 31 Oktober 2003; wawancara CAVR dengan Tomas Gonçalves, 23 Oktober 2003. Narasi yang berbeda dapat dibaca dalam pernyataan tertulis Olandino Luis Maia Guterres, Partisan, kepada CAVR.
80. Geoffrey Robinson, *East Timor 1999 - Crimes Against Humanity*, A Report Commissioned by the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Los Angeles, UCLA, Juli 2003, hal. 160, Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004.
81. Wawancara dengan Manuel de Oliveira, 10 Oktober, 2003, Alas; wawancara dengan Bonifacio Guterres, 10 Mei, 2003, Baucau; pandangan yang bertentangan terdapat di wawancara dengan Antonio do Rosário, 23 Juni 2003, Hera.
82. Wawancara CAVR dengan Miguel Sanches, Maubara (Liquiça), 2003.
83. Tapol, Occasional Report No. 26, hal. 4.
84. Wawancara SCU dengan Tomas Gonçalves, 8 Agustus, 2000, hal. 21.
85. Kodam IX Udayana/Korem 164, Rekapitulasi PA/BA/TA ABRI Putra Daerah Timor-Leste, Dili, Juli 1998
86. Conboy, *Kopassus*, hal. 269.
87. *Ibid*, hal. 272
88. Pernyataan HRVD nomor #02281, #00706, #02130, #01619, #01632, dan #01633.
89. Wawancara CAVR dengan Antonio Babo Calsinha, Ermera, 28 Mei, 2003.
90. Wawancara dengan Geraldo da Cruz, 28 Juni 2004; pernyataan HRVD nomor #03039 dan #00643; wawancara dengan Bonifacio Guterres, Baucau 10 Mei, 2003.
91. Wawancara CAVR dengan Geraldo da Cruz, staf CAVR, 28 Juni 2004; pernyataan HRVD #00663.
92. Wawancara dengan Sebastião da Cunha, Manatuto, 12 Mei 2004; wawancara dengan Geraldo da Cruz, Dili, 28 Juni 2004.
93. Korem 164, Seksi-Intel, "Rencana Penyusunan Kembali Rakyat Terlatih".
94. Pernyataan HRVD #07336-02; 07735-09.
95. Pernyataan HRVD # 06797-02; 07081-03; 07059-01.
96. General Prosecutor of the United Nations Transitional Administration in East Timor, Indictment against Joni Marques et al, hal. 6; transkrip pembelaan Joni Marques, Case 9-PID.C.G/2000, hal. 38.

97. Wawancara CAVR dengan João da Silva, Vemasse, Baucau 14 Juni, 2003.
98. Robinson, *East Timor 1999*, Submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 84.
99. Lihat. "Tinjauan Strategis Pembangunan Kekuatan dan Kemampuan Komando Antar Resort Kepolisian 15.3 Timor-Leste Tahun 1978-1983," Dili, Maret 1978, Lampiran C, hal. 4.
100. "Daerah Pertahanan Kemanan Komando Antar Resor Kepolisian 15.3 Timor Timur. Tinjauan Strategis Pembangunan Kekuatan dan Kemampuan Komando Antar-Resor Kepolisian 15.3 Timor Timur tahun 1978 – 1983. Lampiran C, hal. 4, Dili, Maret 1978.
101. *Korps Marinir TNI AL, 1970-2000*, Dinas Penerangan Korps Marinir, Jakarta, 2000, hal. 219; wawancara dengan Aleixo Ximenes, 2 Februari, 2004.
102. Dokumen rahasia Daerah Pertahanan Keamanan Komando Antara Resort Kepolisian 15.3 Timor-Timur, "Laporan Komando Komtarres 15.3 Timor-Leste Dalam Rangka Kunjungan Kapolri Beserta Rom an Ke Daerah Operasi Timor-Leste," Lampiran 17, Juni 1978.
103. Dokumen rahasia Komando Daerah Militer XVI/Udayana, Komando Resort Militer 164/Wira Dharma, "Instruksi Operasi No. INSOP/03/II/1982, hal. 5. [Catatan: karena tidak ada catatan tentang Wanra sebelumnya, maka dokumen ini barangkali menunjuk kepada Hansip yang bertugas sebagai Wanra]
104. *Ibid*, hal. 7-8
105. *Ibid*, hal. 6
106. Petunjuk Teknis No. JUKNIS/06/IV/1982, Babinsa/TPD Activity in developing and phasing out Trained People's Resistance Forces, dikutip dalam Budiardjo dan Liem, hal. 223 - 227
107. Petunjuk Teknis No. JUKNIS/06/IV/1982, Babinsa/TPD Activity in developing and phasing out Trained People's Resistance Forces, dikutip dalam Budiardjo dan Liem, hal. 223; Dokumen rahasia Komando Daerah Militer XVI/Udayana, Komando Resort Militer 164/Wira Dharma, "Instruksi Operasi No INSOP/03/II/198, hal. 5; Lowry, hal. 111.
108. Pernyataan HRVD # 00626-02; 00796; 0626-02.
109. Wawancara dengan Marcelino Soares, 8 Juli 2003; Budiardjo dan Liem hal. 134; pernyataan HRVD # 06018-05, 00429-05
110. *Korps Marinir TNI AL 1970-2000*, Dinas Penerangan Korps Marinir, Jakarta, 2000, hal. 219.
111. Pernyataan HRVD # 07273, 03113-02, 7037
112. Lowry, hal. 111.
113. *Ibid*, hal. 112
114. Laporan KPP HAM Timor-Leste, 31/01/2000, alinea 38.
115. Wawancara CAVR dengan José Sales dos Santos, Liquiçá 25 Juli 2003, Bazartete, wawancara CAVR dengan Pedro dos Santos, Liquiçá, 9 Juli 2003.
116. Moore, hal. 25
117. Instruksi-Operasi No: Insop/03/II/1982, hal. 8.
118. Pernyataan HRVD # 07455-02
119. Laporan Komando, Komtarbes 15.3 Timor Timur Dalam Rangka Kunjungan Kapolri beserta rombongan ke daerah operasi Timor-Leste, hal.15
120. Alfredo Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Anak dan Konflik, 29 Maret 2004.
121. Tomas Goncalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, 15-18 Desember; wawancar CAVR dengan Tomas Goncalves, Dili, 23 Oktober 2003.
122. Petunjuk Tehnis Nomor: Juknis/05/I/1982 tentang Sistem Keamanan Kota dan Daerah Pemukiman," tanpa tandatangan, tanpa tanggal (halaman terakhir hilang).
123. Pernyataan HRVD # 07092-04
124. "Petunjuk Tehnis Nomor: Juknis/05/I/1982 tentang Sistem Keamanan Kota dan Daerah Pemukiman," hal. 5.
125. Dokumen rahasia Komando Daerah Militer XVI/Udayana, Komando Resor Militer 164/Wira Dharma "Instruksi Operasi No. INSOP/03/II/1982, hal. 1 (tidak lengkap).
126. "Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: KEP/03/II/1977," hal. 45; Departemen Pertahanan Keamanan, "Keputusan Menteri Pertahanan-Keamanan /Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: KEP/23/X/1978, hal. 20; Komando Resor Militer 164, "Petunjuk Tehnis Nomor: JUKNIS/01-A/IV/1982," tandatangan Williem da Costa, 10 September 1982, tetapi dihasilkan

- April 1982; Komando Operasi Keamanan Timor-Leste, "Prosedur Operasi Tetap Nomor: PROTAP/3/IV/1988, tertanggal 30 April 1988," Lampiran E-2, hal. 3; Kodam IX Kolakops, "Rencana Operasi 'Halo Kapaz,'" tertanggal 31 August 1991, rahasia), dikutip dalam Moore, hal. 21.
127. Robinson, *East Timor 1999*, Submisi OHCHR kepada CAVR hal. 30.
 128. 'Laporan Komando Komtarres 15.3 Timor-Leste Dalam Rangka Kunjungan Kapolri Beserta Rom an Ke Daerah Operasi Timor-Leste,' Lampiran 17; Kantor Statistik Provinsi Timor Timur, *Timor-Timur Dalam Angka 1981*, hal. 56.
 129. Lowry, hal. 112.
 130. Wawancara CAVR dengan Joaquim Fonseca, Dili, 23 Mei 2004.
 131. Robinson, Submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 85.
 132. "Gadapaksi Tegakkan Integritas Timtim", *Suara Timor-Timur*, 12 Agustus 1996; Robinson, Submisi OHCHR kepada CAVR, "Chapter 6. Militias: History, Formation, and Legal Recognition," hal. 86.
 133. "Gada Paksi Kembangkan 17 Bidang Usaha di Timtim", *Suara Timor-Timur*, 14 Februari 1996; dan "HUT Kopassus Memiliki Makna Refleksi dan Introspeksi", *Suara Timor-Timur*, 17 April 1996.
 134. Komando Daerah Militer IX Udayana/Komando Resor Militer 164, Rekapitulasi Unsur Perlawanan Wilayah Provinsi Timor-Leste, Periode Tahun 1997/98, April 1998
 135. Robinson, *East Timor 1999*, Submisi OHCHR kepada CAVR hal. 98.
 136. Ibid, hal 87.
 137. Gugatan Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat, terhadap Wiranto, Zacky Anwar Makarim, Kiki Syahnakri, Adam Rachmat Damiri, Suhartono Suratman, Muhammad Noer Muis, Yayat Sudrajat, Abilio Jose Osorio Soares, Pengadilan Dili, Timor-Leste 22 Februari 2003.
 138. Robinson, *East Timor 1999*, Submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 98.
 139. Ibid, hal 87, 98.
 140. Ibid, hal. 102-103.
 141. Laporan KPP HAM Timor-Leste, 31/01/2000, alinea 51.
 142. Robinson, *East Timor 1999*, Submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 92-93, 104-105.
 143. Ibid, hal. 93
 144. Ibid, hal. 94
 145. Ibid, hal. 100.
 146. Ibid, hal. 100.
 147. Ibid, hal. 95.
 148. Ibid, hal. 101-103
 149. Ibid, hal. 106-113
 150. Ibid.
 151. Ibid.
 152. Ibid, hal. 107
 153. Ibid, hal. 103
 154. Ibid, hal. 104-105.
 155. Robinson hal. 129.
 156. Ibid, hal. 125, 129.
 157. Ibid, hal. 36.
 158. Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary-General, New York, 31 January 2000, A/54/726, S/2000/59, Alinea 136-140.
 159. Ian Martin, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-18 Maret 2003.
 160. Laporan KPP HAM Timor-Leste, , alinea 177, 180.
 161. Ibid, alinea 185, 191.
 162. Ibid, alinea 180.
 163. Ross Coulthart, "Timor on the brink", *Sunday Program*, Channel 9, Sydney, Australia. Ditayangkan Juni 1999.
 164. Laporan KPP HAM Timor-Leste, alinea 184, 185.
 165. Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.

166. Ibid.
167. Arnaldo dos Reis Araújo, menjawab pertanyaan Saudara Yayat Handayana, Jakarta, 10 September 1980.
168. James Dunn, *East Timor: Rough Passage to Independence*, Longueville Books, NSW, 2003, hal. 71.
169. Dokumen rahasia Daerah Pertahanan Keamanan-Komando Antar Resort Kepolisian 15.3 Timor-Leste, Tinjauan Strategis Pembangunan Kekuatan dan Kemampuan Komando Antar-Resor Kepolisian 15.3 Timor Timur tahun 1978-1983
170. Roy Pakpahan, *Mengenal Timor Timur Dulu dan Sekarang*, Solidaritas Indonesia untuk Perdamaian Timor Timur (Solidamor), Jakarta, September 1998 hal. 16.
171. Wawancara CAVR dengan Armindo Soares Mariano, Kupang, 20 Juli 2004; Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
172. Roy Pakpahan, hal. 18.
173. Mario Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Perempuan dan Konflik, April 2003.
174. Monis da Maia, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik. Politik internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003
175. Pakpahan, hal. 19
176. Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 12 September 2003.
177. Jon Pedersen dan Marie Arneberg (ed.), *Social and Economic Conditions in East Timor*, International Conflict Resolution Program, Columbia University, New York, [tanpa tahun penerbitan], hal. 115.
178. Ibid, hal. 116.
179. Wawancara CAVR dengan Armindo Soares Mariano, mantan Bupati Viqueque, Kupang, 20 Juli 2004.
180. Kantor Statistik Provinsi Timor-Timur, *Timor-Timur Dalam Angka*, Dili, 1981.
181. Laporan DPRD Tingkat I Timor-Timur kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tentang Masalah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Timor-Timur, Dili, 3 Juni 1981; Dunn, *East Timor: A People Betrayed*, 240-241
182. 'DPRD complains', Report 102/DPRD/VII/1981, 3 Juni 1981, diterjemahkan dalam Timor Information Service No 32, Sept/Oct 1981, hal. 6.
183. Dunn, hal. 290.
184. 'Radiogram Menhankam/Pangab No. RDG/Siaga/240/B/VIII/1976,' tertanggal 14 Agustus 1976 [arsip CAVR].
185. Kementerian Pertahanan dan Keamanan 'Nomor: KEP/03/II/1977 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Daerah Pertahanan-Keamanan Timor Timur, Kodahankam Tim-Tim,' tertanggal 18 Februari 1977 [arsip CAVR].
186. Ulu Emanuel (ed), *20 Tahun Timor-Timur Membangun*, Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur, Dili, 1995, hal. 97.
187. Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
188. Australian Parliamentary Delegation Report, 1983, hal. 66; wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
189. Ulu Emanuel, hal. 100.
190. Ibid, hal. 99
191. Jon Pedersen dan Marie Arneberg, *Social and Economic Conditions in East Timor*, International Conflict Resolution Program, Columbia University, New York, [tanpa tahun penerbitan], hal. 117.
192. Ibid, hal. 116.
193. TAPOL, Occasional Report No. 26 Oktober 1998; Taudevin, *East Timor: Too Little Too Late*, Duffy and Snellgrove, Sydney, 1999 hal. 77-78.
194. Pedersen dan Arneberg (ed.), hal. 116.
195. Ibid, hal. 118.
196. Ibid, hal. 117.
197. Wawancara CAVR dengan Claudio Vieira, Dili, 10 Juni 2004.
198. Wawancara CAVR dengan Armindo Soares Mariano, mantan Bupati Dili, Kupang, 20 Juli 2004; Wawancara CAVR dengan Claudio Vieira, mantan Bupati Lautém, Dili, 10 Juni 2004.

199. Wawancara dengan Armindo Soares Mariano, Kupang 20 Juli 2004
200. Pedersen dan Arneberg (ed.), hal. 116.
201. Mubyarto et al., *East Timor: The Impact of Integration*, Gadjah Mada University, Yogyakarta 1990, diterjemahkan oleh Indonesia Resources and Information Program, Australia, 1991, hal. 50.
202. Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
203. Ulu Emanuel, hal. 163.
204. Mubyarto et al, hal. 61.
205. Kantor Statistik Timor-Timur, *Timor-Timur Dalam Angka 1983*, hal. 32; Kantor Statistik Timor-Timur *Timor-Timur Dalam Angka 1997*, hal. 57.
206. Mubyarto et al, hal. 60.



Foto dari arsip CAVR

Chega!

Bagian

5.

Resistensi: struktur dan strategi

Bagian 5. Resistansi: Struktur dan strategi

451 | Pendahuluan

454 | Fretilin dan *base de apoio*

455 | Pengorganisasian masyarakat sipil

458 | Pengorganisasian militer

461 | Program sosial-ekonomi Fretilin

462 | Produksi pertanian

462 | Kesehatan

463 | Pendidikan dan kebudayaan

465 | Emansipasi perempuan

465 | Sistem peradilan

468 | Strategi

471 | Perang rakyat jangka panjang

473 | Konflik internal

474 | Politik memerintah senjata

475 | ***Suicido ideológico***

477 | Strategi perang

480 | Akhir *base de apoio*

484 | Restrukturisasi Resistansi 1981 - 1987

485 | Reorganisasi Resistansi untuk menghadapi keadaan baru

490 | Strategi

495 | Falintil Pasca-1987

500 | **Boks: Struktur Falintil 1987 sampai 1999**

503 | Gerakan perjuangan bawahan

Daftar tabel:

456 | **Tabel 1** : Struktur regional Fretilin mulai Mei 1976

457 | **Tabel 2** : Struktur administrasi Fretilin

488 | **Tabel 3** : Pembagian wilayah (region) secara militer pada Konferensi Reorganisasi Nasional

Resistensi: Struktur dan strategi

Pendahuluan

1. Resistansi terhadap kekuasaan pendudukan Indonesia di Timor-Leste mengalami perkembangan yang cukup berliku. Bagian ini memberikan tinjauan mengenai gerakan Resistansi, mencakup kemunculannya pada masa administrasi Fretilin setelah terjadinya Gerakan Bersenjata 11 Agustus 1975 oleh UDT; dampak penghancuran basis-basis Fretilin pada 1978-1979 oleh tentara Indonesia termasuk hilangnya sejumlah pemimpin Fretilin/Falintil dan berakhirnya strategi ‘perang rakyat jangka panjang’; pembangunan kembali Falintil, front bersenjata Resistansi, setelah 1987 serta struktur dan strateginya sampai referendum 1999; serta struktur dan strategi front klandestin selama pendudukan. Front ketiga gerakan Resistansi, front diplomatik, dibahas dalam Bab 7.1: Hak penentuan nasib sendiri, dan karena itu tidak dibahas secara terperinci di sini. Komisi mencatat bahwa bagian ini merupakan langkah awal dalam upaya memahami salah satu segi yang kompleks dari sejarah Timor-Leste dan masih diperlukan penelitian lebih lanjut di masa mendatang.
2. Resistansi ini berasal dari konflik bersenjata yang dipicu oleh Gerakan Bersenjata 11 Agustus 1975. Gerakan UDT ini bertujuan menyingkirkan unsur-unsur “komunis” dalam Fretilin yang mereka anggap membahayakan kepentingan Timor-Leste. Fretilin, yang berhasil mendapatkan dukungan sebagian besar orang Timor-Leste dalam angkatan bersenjata kolonial Portugis, memenangi pertarungan dalam waktu kurang daripada 20 hari. Dengan kemenangan atas UDT dan kepergian pemerintah kolonial Portugis, Fretilin mendapati dirinya harus menjadi pemerintah *de facto* bagi negeri bekas koloni itu. Pemimpinnya, yang sebelumnya percaya bahwa mereka akan memenangi kemerdekaan negeri tanpa melalui konflik bersenjata, tiba-tiba menghadapi keadaan baru yang mengharuskannya melakukan perombakan organisasi.
3. Invasi militer Indonesia dengan kekuatan besar pada 7 Desember 1975 membuat Fretilin bersama sayap bersenjatanya, Angkatan Bersenjata Pembebasan

Nasional Timor-Leste (Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste, Falintil) mengungsi ke hutan untuk menyusun kembali kekuatannya menjadi kekuatan resistansi bersenjata terhadap kekuasaan asing. Fretilin menghadapi banyak persoalan dalam proses reorganisasi. Muncul perbedaan pendapat mengenai struktur dan lebih-lebih mengenai strategi yang akan diterapkan oleh Fretilin/Falintil. Perubahan struktur dan strategi tidak semata-mata mencerminkan perubahan keadaan perang, tetapi sekaligus hasil dari pertentangan di dalam tubuh gerakan Resistansi itu sendiri.

4. Fakta bahwa mayoritas rakyat mengungsi ke hutan merupakan masalah tersendiri. Sejumlah pemimpin Resistansi berpandangan bahwa perang yang mereka lancarkan bukan sekadar bertujuan untuk mengusir agresor dari luar, tetapi sekaligus suatu revolusi menghapuskan tatanan masyarakat lama yang dianggap menindas rakyat, yang dikenal dengan sebutan 'pengisapan terhadap manusia oleh manusia' (*exploração do homem pelo homem*) dan menyusun struktur baru masyarakat tanpa penindasan sebagai penggantinya. Karena itu, bagi mereka perang ini adalah perang revolusioner. Setelah invasi Indonesia, pandangan ini menjadi pandangan mayoritas pemimpin Fretilin. Di hutan, penduduk sipil diorganisasi untuk mendukung resistansi bersenjata dengan dukungan logistik maupun politik. Dalam rangka itu, penduduk diorganisasi melalui program-program sosial dan politik untuk mewujudkan struktur masyarakat tanpa penindasan dan pengisapan.

5. Sebagian pemimpin yang lain, terutama yang berlatarbelakang militer, cenderung memandang perang ini dari sudut pandang militer semata dan menganggap penduduk sipil merupakan beban bagi Resistansi karena sebagian besar kekuatan militer akan tersita untuk melindungi kehidupan penduduk sipil. Dengan gencarnya serangan Indonesia terhadap basis-basis resistansi Fretilin, pertentangan di dalam Resistansi semakin meningkat. Karena tidak bisa bertahan, sebagian pemimpin membolehkan atau bahkan menganjurkan penduduk untuk menyerah.

6. Ada juga pemimpin yang berusaha melakukan perundingan dengan lawan, tapi tindakan itu ditentang dengan keras dan kadang-kadang memunculkan pertentangan bersenjata di dalam Resistansi itu sendiri.

7. Hancurnya 'wilayah bebas' (*zonas libertadas*) memberikan keadaan yang samasekali baru. Penduduk sipil, sebagian pemimpin sipil Fretilin, dan sebagian pasukan Falintil turun dari gunung dan menyerah atau ditangkap karena tidak bisa bertahan terhadap gempuran militer Indonesia. Sebagian satuan Falintil dan sejumlah kecil pemimpin Fretilin berhasil menghindari operasi 'pegepungan dan pemusnahan' dan bertahan di hutan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Keterpisahan antara penduduk sipil dan resistansi bersenjata ini membuat resistansi memasuki tahap baru; dalam tahap ini, Falintil di hutan didukung oleh penduduk sipil yang tinggal di wilayah-wilayah permukiman yang dikontrol tentara Indonesia. Ini berlawanan dengan keadaan sebelumnya, di mana kader-kader sipil Fretilin memimpin pengorganisasian penduduk sipil di basis pendukung resistansi (*base de apoio*), sementara Falintil bertugas mengamankan kehidupan rakyat.

8. Pasukan Falintil disusun kembali ke dalam unit-unit kecil independen tanpa suatu pangkalan tetap yang melakukan serangan-serangan gerilya terhadap tentara Indonesia. Dukungan logistik yang dulunya diperoleh dari penduduk sipil yang berada di wilayah *base de apoio* Resistansi, sekarang harus dicari dari kalangan penduduk yang tinggal di wilayah yang dikuasai musuh. Keadaan ini mengharuskan pihak resistansi di hutan, yang sekarang semata-mata merupakan resistansi bersenjata, untuk mengembangkan cara-cara baru pengorganisasian penduduk sipil sebagai basis dukungan utama bagi mereka.

9. Kegiatan bawahan (*clandestina*) untuk mendukung perjuangan bersenjata di hutan dan perjuangan diplomatik di luar negeri, menjadi semakin penting. Kegiatan ini awalnya dilakukan oleh kader-kader Fretilin di kota, yang tidak sempat melarikan diri ke hutan ketika terjadi invasi besar-besaran Indonesia pada 7 Desember 1975. Setelah hancurnya *zonas libertadas*, para kader politik Fretilin dan mantan komandan serta prajurit Falintil juga melakukan kegiatan bawahan untuk mendukung perjuangan. Peran mereka sangat penting sebagai penyedia logistik dan informasi bagi Falintil dan penghubung di antara pasukan-pasukan Falintil yang terpisah satu sama lain, serta sebagai jalur komunikasi antara pemimpin resistansi bersenjata di hutan dengan pemimpin perjuangan diplomatik di luar negeri.

10. Pada 1981, didirikan Conselho Revolucionária de Resistência Nacional (CRRN – Dewan Revolusioner Resistansi Nasional), yang secara resmi mengambilalih kepemimpinan atas Resistansi. Tetapi, pada praktiknya, Falintil yang memimpin Resistansi, karena satu-satunya pemimpin Resistansi yang berfungsi adalah Falintil. Walaupun panglima Falintil dijabat oleh Komisaris Politik Nasional (*Comissário Político Nacional*), yang adalah orang tertinggi Fretilin di dalam negeri, kekuatan nyata Falintil berasal dari posisinya sebagai cabang Resistansi yang paling aktif. Memang, kegiatan politik di kalangan rakyat pada saat itu terbatas pada pemberian bantuan logistik kepada Falintil.

11. Conselho Nacional da Resistência Maubere (CNRM – Dewan Nasional Resistansi Maubere) dibentuk pada 1987 untuk menggantikan CRRN. Ini mengubah peran Fretilin dalam kepemimpinan Resistansi menjadi semata-mata bersifat simbolis. Pemimpin Resistansi menyadari bahwa karena keunggulan kekuatan militer musuh, kemerdekaan tidak akan bisa dicapai melalui perang dan sebaiknya mereka memusatkan perhatian pada penyelesaian damai dengan berfokus pada arena internasional. Perjuangan di bidang diplomasi, yang sesungguhnya telah dilancarkan sejak sebelum invasi Indonesia pada 1975, mendapatkan arti penting baru. Dukungan internasional tidak hanya dicari dari negara-negara nonblok dan blok sosialis saja, tetapi terutama diupayakan untuk diperoleh dari negara-negara demokrasi liberal yang sebelumnya lebih banyak mengabaikan Timor-Leste.

12. Sebagian pemimpin Resistansi memandang perlu membentuk wadah baru yang menampung semua partai politik dan “kekuatan-kekuatan sosial-politik lain” yang menginginkan kemerdekaan, terutama dari luar Fretilin. CNRM adalah wadah baru yang dimaksudkan sebagai gerakan persatuan nasional yang berjuang melawan pendudukan dalam tiga front: front bersenjata di hutan dalam negeri, front

bawahtanah (*clandestina*) di desa dan kota Timor-Leste maupun di Indonesia, dan front diplomatik di arena internasional (untuk keterangan lebih lanjut tentang front diplomatik lihat Bab 7.1: Hak penentuan nasib sendiri). Seiring dengan itu, Falintil pun mengalami 'pemutusan hubungan kepartaian' (*despartidarização*) dari Fretilin dan menjadi angkatan bersenjata nasional di bawah kepemimpinan CNRM. Keadaan ini berlanjut setelah pembentukan Conselho Nacional da Resistência Timorese (CNRT – Dewan Nasional Resistansi Rakyat Timor) menggantikan CNRM pada April 1998 di Peniche, Portugal. CNRT kemudian memimpin Resistansi hingga berakhirnya pendudukan Indonesia pada 1999.

Fretilin dan *base de apoio*

13. Invasi militer Indonesia menyebabkan pengungsian besar-besaran penduduk sipil ke hutan dan gunung-gunung bersama Fretilin. Pokok persoalan ini dibahas secara terperinci dalam Bab 7.3: Pemandahan paksa dan kelaparan.

14. Menyediakan tempat tinggal, bahan makanan, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya untuk sejumlah besar pengungsi merupakan persoalan besar bagi Fretilin. Fretilin yang telah mulai menjalankan program sosial dan politik pada sekitar November 1974 agaknya siap mengorganisasikan masyarakat. Para kader segera menyusun administrasi dari tingkat kampung (*aldeia*), desa (*suco*), sampai tingkat distrik (*região*) dengan melanjutkan struktur organisasi yang ada sebelum mengungsi. Pengurus Fretilin tingkat *aldeia* mengorganisasikan kembali penduduk *aldeia*-nya, pengurus tingkat *suco* mengorganisasikan kembali penduduk *suco*-nya, demikian seterusnya sehingga di pedalaman terbentuk administrasi pemerintahan di bawah Fretilin. Agaknya pengorganisasian ini merupakan inisiatif dari bawah oleh para kader. Eduardo de Jesus Barreto, seorang kader dari zona Ermera mengemukakan:

Sampai awal 1976 tidak ada struktur formal yang kuat di basis, tetapi militan Fretilin di basis bisa mengorganisasi penduduk walaupun tidak formal...Masyarakat juga secara pribadi atau kelompok melakukan kegiatan pertanian seperti menanam jagung, ubi kayu, dan tanaman lain yang bisa dimakan.¹

15. Pengorganisasian yang spontan itu terjadi pada awal perang sampai menjelang pertengahan 1976. Pada waktu itu tentara Indonesia hanya berhasil menguasai kota-kota besar dan jalur jalan di pantai utara dari barat ke timur serta jalur tengah dari utara ke selatan. Xanana Gusmão mengemukakan kesaksiannya kepada Komisi:

Musuh datang masuk Dili, Baucau, Lospalos, penduduk lari. Masih ada kebingungan besar. Setelah itu mulai stabil...Ketika musuh bisa menguasai jalan-jalan utama, jalur utara dan dari utara ke selatan, [keadaan] mulai terasa stabil. Keadaan ini memberi ide pada Komite Sentral untuk pada Mei 1976 membentuk enam sektor...[berdasarkan pada] pembagian administrasi politik dari aldeia, suco, zona, região, dan sector.²

Pengorganisasian masyarakat sipil

16. Pengorganisasian masyarakat (dan militer) menjadi bahan pembahasan dalam sidang pleno kedua Komite Sentral Fretilin yang diadakan di Soibada, Manatuto, pada Mei 1976 (juga disebut 'Konferensi Soibada').* Dalam sidang ini diputuskan untuk membentuk struktur sipil dan militer yang berlaku secara nasional. Wilayah yang dikuasai oleh Fretilin (yang disebut '*zonas libertadas*' – wilayah yang bebas) dibagi menjadi enam sektor.[†] Sektor tersebut adalah wilayah militer yang dikuasai oleh komando militer dan sekaligus wilayah administrasi politik yang dikendalikan oleh para pengurus Fretilin. Sesuai dengan prinsip '*a política comanda fuzil*' (politik memerintah senjata), para komandan militer tunduk di bawah kepemimpinan pengurus politik sipil.[‡] Tetapi, sebagian pemimpin militer tertinggi, seperti kepala staf dan dua orang wakil menteri pertahanan, juga menjadi anggota Komite Sentral Fretilin.

17. Posisi *Comissário Política* (Komisaris Politik) yang merupakan pemimpin tertinggi di sektor untuk urusan administrasi politik maupun untuk urusan militer juga diciptakan di Soibada. Semua komisaris politik adalah anggota Komite Sentral Fretilin.[§] Sektor-sektor, distrik yang dicakup, dan komisaris politik masing-masing adalah sebagai berikut:

* Menurut dokumen ini, sidang pleno diadakan dari 15 Mei sampai dengan 2 Juni 1976. Sidang memutuskan 'tiga prinsip pembimbing Revolusi Maubere', yaitu: perang rakyat, perang jangka panjang, dan mengandalkan kekuatan sendiri. [*Relatório da Delegação do Comité Central da Fretilin em Missão de Serviço no Exterior do País*, hal. 3.]

† Seharusnya dibentuk tujuh sektor, dengan sektor ketujuh untuk wilayah kantong Oecussi, namun keadaan tidak memungkinkan pembentukan sektor ini. [Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 11 Mei 2004 dan Francisco Gonçalves, Dili, 14 Juni 2003.]

‡ Prinsip ini sudah diberlakukan sejak terbentuknya Falintil pada Agustus 1975 setelah terjadinya Gerakan Bersenjata 11 Agustus. Sejak waktu itu, Falintil berada di bawah komando Komite Sentral Fretilin. Lihat, antara lain, wawancara CAVR dengan Lucas da Costa (salah seorang yang membentuk satuan pertama Falintil di Aileu), 21/6/2004, dan wawancara CAVR dengan Taur Matan Ruak, 9/6/2004.

§ Menurut Xanana Gusmão, yang pada saat itu merupakan anggota Komite Sentral Fretilin, departemen-departemen pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tidak berfungsi lagi, yang berfungsi adalah (pemerintahan) Fretilin. (Wawancara CAVR dengan José Alexandre [Xanana] Gusmão, 7/7/2004.) Dalam Komite Sentral Fretilin terdapat Komite Permanen yang berwenang mengambil keputusan jika tidak bisa diadakan sidang pleno Komite Sentral. (Wawancara CAVR dengan Jacinto das Neves Raimundo Alves, Dili, 11 Mei 2004.)

Tabel 1: Struktur regional Fretilin mulai Mei 1976

| Sektor | Distrik yang dicakup | Komisaris Politik |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Ponta Leste (Ujung Timur) | Lautém | Juvenal Inacio (Sera Key)* |
| Centro Leste (Tengah Timur) | Baucau dan Viqueque | Vicente dos Reis (Sa'he)† |
| Centro Norte (Tengah Utara) | Manatuto, Aileu, dan Dili | João Bosco Soares |
| Centro Sul (Tengah Selatan) | Manufahi dan Ainaro | Hamis Bassarewan (Hata) |
| Fronteira Norte (Perbatasan Utara) | Ermera, Liquiçá, dan sebagian Bobonaro | Hélio Pina (Maukruma) |
| Fronteira Sul (Perbatasan Selatan) | Covalima dan sebagian Bobonaro | César Correia Lebre (César Mau Laka) |

18. Dalam menjalankan tugasnya para Komisaris Politik dibantu oleh para asisten komisiariat (*Assistente Comissariado*).^{*} Para asisten komisiariat bertugas untuk bidang-bidang tertentu seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, organisasi perempuan, dan propaganda politik. Sekretariat tempat para pengurus Fretilin sektor bekerja disebut *comissariado*. Sektor dibagi ke dalam unit-unit administratif yang lebih kecil.[§]

* Dalam Dewan Menteri RDTL, Sera Key menjadi Menteri Keuangan. Setelah rapat di Aikurus (Remexio, Aileu), sebagian wilayah Baucau dan Viqueque, yaitu yang terletak di timur jalan yang menghubungkan Baucau dengan Viqueque, dimasukkan ke Sektor Ponta Leste. Perubahan ini akibat dari penguasaan Indonesia atas jalan tersebut, yang menyebabkan sulitnya komunikasi antara kedua wilayah dalam satu sektor tersebut. [Wawancara CAVR dengan Francisco Gonçalves, Dili, 14 Juni 2003; Xanana Gusmão, *To Resist Is To Win! The Autobiography of Xanana Gusmão*, ed. Sarah Niner, Victoria: Aurora Books, 2000, hal. 49]

† Dalam Dewan Menteri RDTL ia menjabat Menteri Perburuhan dan Kesejahteraan.

‡ Di sektor Ponta Leste, Delegado Komissariado lebih dikenal sebagai DK (dilafalkan "de kapa"). [Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004.]

§ Ada yang menyebut adanya unit "*barracas*" (barak), tetapi ini bukan bagian dari struktur administrasi formal.

Tabel 2: Struktur administrasi Fretilin

| Unit Administratif | Wilayah | Pemimpin |
|---------------------------|--|---|
| Region (<i>região</i>) | Sama dengan wilayah yang dicakup oleh <i>conselho</i> dalam sistem pemerintahan kolonial Portugis, sekarang disebut distrik. | Seorang sekretaris (<i>secretário</i>) dengan seorang wakil sekretaris regional (<i>vice secretário regional</i>) |
| Zona (<i>zona</i>) | Sama dengan wilayah yang dalam sistem pemerintahan Portugis disebut <i>posto</i> , sekarang disebut subdistrik. | Komite Zona (<i>Comité da Zona</i>) dipimpin oleh seorang <i>secretário</i> dan <i>vice secretário da zona</i> . Dalam <i>Comité da Zona</i> ada: Komisi Kesehatan (<i>Comissão de Saúde</i>), Komisi Pertanian (<i>Comissão da Agricultura</i>), dan Komisi Pendidikan (<i>Comissão da Educação</i>). ³ Dalam komisi-komisi bekerja para aktivis (<i>activista</i>), yang melaksanakan berbagai program. Juga ada <i>activista</i> yang bertugas di bidang pendidikan politik. |
| Desa (<i>suco</i>) | Sama dengan <i>suco</i> sekarang ini. | <i>Secretário de suco</i> dibantu oleh seorang <i>vice secretário</i> . Mereka memimpin badan-badan di tingkat desa (yang disebut <i>secção</i>), yaitu: seksi kesehatan (<i>secção de saude</i>), seksi pertanian (<i>secção da agricultura</i>), seksi pendidikan (<i>secção da educação</i>), dan seksi propaganda politik (<i>secção da propaganda política</i>). |
| Kampung (<i>aldeia</i>) | Sama dengan <i>aldeia</i> sekarang. | Penanggungjawab kampung (<i>responsável da aldeia</i>) |

19. Struktur yang terbangun tersebut adalah kelanjutan dari struktur pemerintah yang dibentuk Fretilin setelah berhasil menguasai wilayah akibat kekalahan UDT dalam Gerakan Bersenjata 11 Agustus. Misalnya di tingkat *zona*, ada yang menyebutkan bahwa pemerintahan dijalankan oleh suatu '*direcção*' (direktoral) yang terdiri atas sekretaris dan wakil sekretaris *zona*, para asisten, para pemimpin organisasi perempuan OPMT dan organisasi pemuda OPJT (Organização Popular Juventude de Timor– Organisasi Rakyat Pemuda Timor) untuk tingkat *zona*.⁴ Model ini berasal dari model struktur Fretilin yang diterapkan pada tingkat distrik setelah Gerakan Bersenjata 11 Agustus (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

20. Struktur ini hanya mengalami sedikit perubahan sampai hancurnya *zonas libertadas*. Pada 1977, akibat penyempitan *zonas libertadas* karena serbuan-serbuan militer Indonesia, pemimpin Fretilin menghapuskan tingkat administrasi *região*, dan *zona* ditempatkan langsung di bawah administrasi sektor. Seiring dengan itu diciptakan posisi baru dengan sebutan *adjunto*. Sama dengan para komisaris politik, *adjunto* adalah anggota Komite Sentral Fretilin. Tugasnya membantu pelaksanaan program sosial-politik Fretilin di tingkat *zona* yang menjadi tanggung jawab pengurus *zona*.⁵ Di satu sektor ada dua sampai tiga orang *adjunto*. Sejak 1978, sebutan *activista* diganti dengan istilah *assistente* (asisten).⁶

Pengorganisasian militer

21. Di bidang militer, ketidakjelasan juga terjadi setelah invasi Desember 1975. Pasukan-pasukan Falintil yang bertugas di wilayah dan kota-kota perbatasan yang jatuh segera setelah serangan tersebut, mundur ke tempat asal masing-masing. Di subdistrik (yang telah diubah namanya menjadi *zona*), mereka kembali membentuk satuan-satuan kompi (*companhias*),⁷ yang dipimpin oleh komandan *zona* (*comandante da zona*). Kebanyakan *comandantes da zona* adalah sersan dalam angkatan bersenjata kolonial Portugis.[†] Di satu *zona* ada satu sampai empat kompi, bergantung pada adanya orang yang terlatih dan persenjataan.⁷ Setiap kompi terdiri atas tiga atau empat peleton (*pelotões*).⁸

* Kompi-kompi ini dibentuk dari mantan prajurit tentara kolonial dan penduduk sipil yang telah mendapatkan latihan militer setelah terjadinya Gerakan Bersenjata 11 Agustus UDT dan bergabung dalam milisi yang dibentuk oleh Fretilin. Sebelumnya, ketika Fretilin mulai menghadapi serangan-serangan dari tentara Indonesia di perbatasan darat sejak Oktober, sebagian anggota milisi telah digabungkan ke dalam satuan-satuan Falintil yang bertugas menghadapi tentara Indonesia di wilayah perbatasan tersebut. [Wawancara CAVR dengan José Alexandre Gusmão, 7/7/2004; Adriano João, 23/4/2003; Filomeno Paixão, 17/6/2004; Lucas da Costa, 21/6/2004; Agostinho Carvaleira Soares, Cailaco, Bobonaro, 13 Agustus 2003; Sebastião da Silva, Juni 2003; Cornelio Gama (alias Nahak Leki, alias L-7), 9 April 2003; dan Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin, Submisi kepada CAVR, CD No. 18.]

† Misalnya, komandan *zona* Quelicai Aquiles Freitas adalah seorang tentara kolonial dengan pangkat terakhir *sargento* (sersan satu). Jabatan terakhirnya dalam angkatan bersenjata kolonial adalah komandan kompi pasukan kavaleri di Atabae (Bobonaro). [Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 10 Juni 2003.] Komandan *zona* Cailaco José Maria adalah seorang mantan tentara berpangkat sersan dua (*furriel*) dalam angkatan bersenjata Portugis di Timor-Leste. [Wawancara CAVR dengan Agostinho Carvaleira Soares, Cailaco, Bobonaro, 13 Agustus 2003.]

22. Kompi-kompi tersebut secara teoretis berada di bawah kendali Staf Umum Falintil (*Estado Maior das Falintil*). Setelah proklamasi Republik Demokratik Timor-Leste pada 28 November 1975, Falintil berada di bawah kendali Departemen Pertahanan Nasional yang dipimpin oleh seorang menteri dan dua orang wakil menteri. Menteri Pertahanan Nasional dijabat oleh Rogério Lobato yang sekaligus juga menjabat *Comandante das Falintil* (Panglima). Jabatan wakil menteri diduduki oleh Hermenegildo Alves dan Guido Soares. Dengan kepergian Rogério Lobato ke luar negeri untuk menggalang dukungan internasional beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan 28 November, kepemimpinan dijalankan oleh dua orang wakil menteri tersebut. Departemen Pertahanan Nasional membawahi *Estado Maior das Falintil* (Staf Umum) yang dipimpin oleh *Chefe do Estado Maior* (Kepala Staf) Guido Soares dan *Sub-Chefe do Estado Maior* (Wakil Kepala Staf) José da Silva.*

23. Akibat invasi, struktur tersebut tidak efektif. Kompi-kompi pasukan berada di bawah kendali para komandan *zona* yang masing-masing beroperasi relatif independen tanpa komando sentral. Mereka lebih banyak bertempur sendiri-sendiri dan mempertahankan *zona* masing-masing. Ini menimbulkan kesulitan untuk mengadakan operasi militer. Gambaran tentang masalah ini dikemukakan oleh Filomeno Paixão de Jesus, yang pada waktu itu menjadi seorang komandan kompi di Liquiçá, kepada Komisi:

Jadi di satu zona...ada satu orang komandan zona. Di bawah komandan zona, ada satu atau dua atau tiga kompi. Saya beri contoh Liquiçá, waktu itu ada tiga kompi, dengan satu komandan zona. Tapi masing-masing hanya berinisiatif di subdistriknya...Ada subdistrik yang senjatanya sangat banyak, ada yang tidak punya senjata.⁹

24. Masalah tersebut diatasi dengan keputusan Konferensi Soibada untuk melakukan reorganisasi militer. Seiring dengan pembentukan sektor, region, dan zona untuk seluruh *zonas libertadas*, dibentuk komando sektor (*comando de sector*), komando region (*comando da região*), dan komando zona (*comando da zona*) untuk masing-masing sektor, region, dan zona.¹⁰ Selain kompi-kompi tempur, dibentuk Pasukan Pertahanan (*Força Auto Defesa*) di tempat permukiman penduduk. Satu unit *Força Auto Defesa* terdiri atas penduduk di permukiman setempat yang telah diberi latihan dasar kemiliteran. Kekuatan *Força Auto Defesa* berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain; di satu zona bisa mencapai satu kompi.¹¹ Sebagian dari mereka bersenjata tajam tradisional seperti tombak dan panah, sebagian lagi bersenjatakan senapan otomatis. Karena kebanyakan tidak bersenjata api, *Força Auto Defesa* juga disebut '*armas brancas*' atau 'pasukan putih' (hanya bersenjatakan senjata tradisional). Tugas utama pasukan ini adalah mempertahankan permukiman, namun sebagian dari mereka juga dikerahkan untuk membantu satuan Falintil yang bertugas di garis depan.¹²

* José da Silva pada paruh kedua 1976 digantikan oleh Domingos Ribeiro. Penggantiannya dilakukan karena José da Silva melawan keputusan Konferensi Soibada untuk reorganisasi pasukan, dan karena itu terjadi pertentangan dengan Komisaris Politik Fronteira Norte, Maukruma, yang bertanggung jawab menerapkan struktur baru tersebut. [Wawancara CAVR dengan Filomeno Paixão de Jesus, Dili, 17 Juni 2004.]

25. Para komandan *zona* tetap membawahi kompi-kompi pasukan, namun sekarang mereka beroperasi di bawah wewenang komandan *region*, sementara komandan *region* berada di bawah komando komando sektor. Dengan reorganisasi ini, Staf Umum Falintil membawahi semua komando teritorial tersebut. Setelah reorganisasi ini, kemampuan militer Falintil untuk menghadapi tentara Indonesia bisa ditingkatkan. Wilayah operasi menjadi lebih luas karena sekarang mereka bisa beroperasi pada wilayah yang lebih luas daripada *zona*. Pasukan dan senjata pun bisa dipindahkan dari satu *zona* ke *zona* lain, sesuai dengan kebutuhan perang.¹³

26. Perubahan di bidang militer lebih lanjut terjadi setelah Konferensi Laline, yang diselenggarakan antara Maret dan Mei 1977.[†] Konferensi Laline memandang konsentrasi satuan pasukan di *zona* sebagai satu kelemahan. Filomeno Paixão de Jesus yang menghadiri konferensi ini mengingat:

Kami memandang bahwa strategi itu tidak lagi baik, karena região [Ermera] akan bilang, "Kami Ermera, jadi kami cuma jadi bagian Ermera", dan Liquiçá akan bilang ia cuma jadi bagian Liquiçá. Sulit untuk memberikan senjata dan amunisi ke região lain. Karena itu, setelah Konferensi Laline, dibentuk kompi sektor yang memberikan keamanan kepada penduduk, dibentuk kompi intervensi yang tidak boleh lagi beraksi dari belakang atau dari luar...Jadi kalau dulu perang di dalam região, sekarang perang di seluruh sektor.¹⁴

27. Dengan perubahan ini, setiap satu kompi pasukan di satu sektor ditempatkan langsung di bawah komandan sektor.

28. Perubahan lebih lanjut terjadi pada sekitar pertengahan 1977, sehubungan dengan konflik di dalam tubuh Fretilin. Komite Sentral Fretilin dalam rapatnya di Aikurus (Remexio, Aileu) menghapuskan Departemen Pertahanan Nasional, termasuk dua posisi wakil menteri pertahanan, setelah evaluasi yang dilakukannya menyimpulkan bahwa departemen ini tidak lagi bekerja secara efektif. Kepemimpinan Falintil selanjutnya berada pada Staf Umum Falintil. Kedua wakil menteri pertahanan "diturunkan" jabatannya menjadi komandan sektor. Hermenegildo Alves menjadi Komandan Sektor Centro Leste dan Guido Soares menjadi Komandan Sektor Centro Sul. Domingos Ribeiro yang sebelumnya menjabat wakil kepala staf menjadi kepala staf. Posisi wakil kepala staf dihapuskan. Di dalam Staf Umum Falintil ada delapan orang staf yang disebut *colaborador do estado maior*, yang menangani berbagai

* Hingga saat itu, satuan terbesar tentara adalah kompi (*companhia*), tidak ada satuan yang lebih besar seperti batalion (*batalhão*).

† Ini adalah sidang Dewan Tertinggi Resistansi dan Komite Politik dari Komite Sentral Fretilin, yang diselenggarakan pada 8 Maret sampai 20 Mei 1977 (*Relatório da Delegação do Comité Central da Fretilin em Missão de Serviço no Exterior do País*, terjemahan, hal. 4). Kemungkinan yang disebut sebagai Dewan Tertinggi Resistansi dalam dokumen ini adalah Dewan Tertinggi Perjuangan (*Concelho Superior da Luta*) yang terdiri atas Presiden RDTL (yang adalah Ketua Fretilin), Wakil Presiden RDTL (Wakil Ketua Fretilin), Wakil Menteri Pertahanan, Menteri Informasi dan Keamanan Nasional, dan *Comissário Política Nacional*. [Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 11 Mei 2004 dan Egas da Costa Freitas, Dili 19 Mei 2004.] Melihat komposisinya, dewan ini bersifat hibrida, antara (partai) Fretilin dan (pemerintah) RDTL.

bidang yang menjadi wewenang Staf Umum, seperti operasi, sandi, informasi, logistik, dan pelatihan.¹⁵

29. Sesuai prinsip kendali sipil atas militer, Presiden Republik Demokratik Timor-Leste yang juga Presiden Fretilin, Nicolau Lobato, membawahi Staf Umum Falintil. Pada waktu yang sama, Nicolau Lobato juga menjabat komisaris politik untuk Staf Umum Falintil, dengan fungsi memberikan orientasi politik untuk tentara.*

30. Pada waktu itu dibentuk pasukan baru yang bernama Brigade Pasukan Gerak Cepat (Brigada de Choque, biasanya disingkat menjadi Brichoq).† Brigade ini dibentuk oleh kepala staf dan langsung berada di bawah komandonya. Pasukan ini tidak menetap di wilayah tertentu, tetapi bergerak beroperasi di seluruh wilayah Timor-Leste.¹⁶ Guido Soares, yang sebelumnya menjadi Kepala Staf Umum Falintil, menjadi komandan Brigade de Choque.¹⁷ Dengan pembentukan brigade ini, dari segi susunan pasukan, sekarang ada Brigade de Choque, kompi sektor, kompi-kompi di zona, dan Força Auto Defesa.

Program sosial-ekonomi Fretilin

31. Pengorganisasian penduduk di *zonas libertadas* menjadi tanggung jawab pengurus sipil Fretilin. Dengan terjadinya invasi, perhatian utama Fretilin adalah bagaimana melancarkan dan mendukung resistansi. Xanana Gusmão, yang waktu itu adalah salah seorang anggota Komite Sentral Fretilin, mengatakan kepada Komisi:

Kita baru melakukan perang dan rakyat ada di antara kita. [Kita membentuk] base de apoio yang konsepnya adalah basis yang berfungsi memberi dukungan logistik dan politik – yang bisa kita katakan revolusi...Komite Sentral Fretilin pada bulan Mei 1976 menerapkan base de apoio. Maka dibentuk enam sektor...Dengan ini telah didefinisikan base de apoio. Telah dibentuk struktur base de apoio. Base de apoio dilaksanakan sebagai mekanisme mengorganisasi penduduk agar bisa melanjutkan perang.¹⁸

32. Tempat-tempat permukiman, yang dalam pembagian wilayah menurut strategi perang disebut ‘zona reta guarda’ (wilayah pemunduran), dijadikan *base de apoio*. Penduduk diorganisasikan untuk melaksanakan program pertanian, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan pembebasan perempuan.¹⁹

* Sementara Komisaris Politik untuk sektor berada di bawah *Comissário Política Nacional* (CPN, Komisaris Politik Nasional), tidak demikian halnya dengan Komisaris Politik Staf Umum Falintil. Apalagi jabatan ini dirangkap oleh Presiden Republik dan Presiden Fretilin. Menurut Jacinto Alves, pada waktu itu Nicolau Lobato juga menjabat Presiden Republik Demokratik Timor-Leste, sehari-hari bekerja di Staf Umum Falintil (wawancara CAVR dengan Jacinto das Neves Raimundo Alves, 11 Mei 2004).

† Brigade ini juga dikenal dengan sebutan ‘Brigada Intervenção’ (Brigade Intervensi), ‘Força de Intervenção’ (Pasukan Intervensi) atau ‘Companhia de Intervenção’ (Kompi Intervensi).

Produksi pertanian

33. Untuk meningkatkan produksi, kerja pertanian dilakukan oleh penduduk yang diorganisasi dalam kelompok kerja (*equipa*).²⁰ Lahan pertanian dibagi menjadi tiga bentuk pemilikan, yaitu pribadi, *coperativa* (koperasi), dan *propriedade estatal* (lahan milik negara).^{*} Lahan pribadi adalah milik setiap keluarga yang dikerjakan oleh seluruh anggota kelompok kerja dan hasilnya tetap menjadi hak setiap keluarga. Lahan koperasi adalah milik seluruh anggota kelompok kerja yang dikerjakan oleh seluruh anggota dan hasilnya dibagi rata kepada seluruh anggota.[†] Sedang *propriedade estatal* dikerjakan oleh semua orang dan hasilnya digunakan untuk keperluan negara, yaitu memberi makan kepada angkatan bersenjata (Falintil), para pengurus sipil, orang tua, dan orang cacat yang tak mampu bekerja, serta untuk cadangan kalau keadaan darurat dan cadangan bibit.²¹ Selain tanaman pangan seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan pisang, juga diusahakan menanam kapas.²²

34. Kaum perempuan juga bekerja dalam produksi pertanian dengan menjalankan kegiatan-kegiatan seperti menumbuk sagu dan membuat anyaman barang-barang keperluan seperti keranjang.²³ Jika perempuan punya anak yang masih harus diasuh, pengasuhannya dilakukan di *crèche* (tempat pengasuhan anak). Pengurusan *crèche* dilakukan secara bergilir oleh penduduk yang diorganisasi di dalam *equipa crèche*.²⁴

35. Pada awalnya, kegiatan produksi pertanian ini berjalan hanya dengan sedikit gangguan. Tetapi keadaan menjadi memburuk dengan terjadinya serangan militer besar-besaran sekitar pertengahan September 1978. Lahan-lahan pertanian yang sudah ditanami tidak bisa dipanen karena penduduk harus terus-menerus berpindah tempat akibat serangan tentara Indonesia. Penyiapan lahan baru pun tidak bisa dilakukan.²⁵

Kesehatan

36. Para kader Fretilin yang bertanggung jawab atas bidang kesehatan, termasuk para dokter tradisional, membuat obat-obatan dari bahan tumbuh-tumbuhan termasuk pil kina dan obat untuk menyembuhkan luka tembak.²⁶ Mereka juga merawat orang-orang yang luka karena pertempuran, termasuk melakukan operasi kecil. Di bidang obat-obatan sempat dilakukan penelitian tentang tumbuh-tumbuhan yang punya khasiat mengobati. Lucas da Costa, yang pada masa akhir pemerintah Portugis menjabat sebagai kepala Rumah sakit Same (Manufahi), mengemukakan pengalamannya di kawasan Uaimori:

* Yang dimaksud adalah negara Republik Demokratik Timor-Leste.

† Para pengurus Fretilin juga harus bekerja dalam kelompok kerja. Tetapi mereka hanya sedikit bekerja di sawah atau ladang karena waktu mereka lebih banyak digunakan untuk menangani tanggung jawab mereka sebagai penanggungjawab politik. [Wawancara CAVR dengan Virgílio da Silva Guterres, Dili, 25 Mei 2004.]

...saya menjalankan penelitian tentang pengobatan dengan obat-obatan tradisional sekitar pertengahan 1976...Di sana kita membangun sebuah rumah sakit, kita membuat studi tentang obat tradisional. Kita kumpulkan beberapa orang yang tahu tentang obat tradisional, kita melakukan beberapa eksperimen, dan kita mencoba membangun sebuah farmasi untuk membuat tablet dan injeksi. Tapi injeksi kita tidak berhasil. Yang berhasil adalah tablet untuk malaria. Untuk sakit kepala kita berhasil membuat, meskipun terlalu kasar, tapi efektif juga.²⁷

37. Mantan pelajar memberikan pendidikan masyarakat mengenai hidup sehat dan penggunaan serta pembangunan kakus umum yang sesuai syarat kesehatan. Virgilio da Silva Guterres dari Zona Venilale (Baucau) mengisahkan pengalamannya:

[Pemuda] yang sudah kelas tiga sekolah dasar direkrut untuk diberi pelatihan tentang alfabetisasi, kesehatan, dan politik. Setelah pelatihan selesai, para peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang disebut Brigada Dinamisadora [Brigade Dinamisator], yang masing-masing terdiri atas lima orang. Tugasnya adalah mengajar tentang huruf, tentang kesehatan, dan membantu orang membuat kakus untuk menjaga standar kesehatan.²⁸

Pendidikan dan kebudayaan

38. Fretilin menyelenggarakan dua jenis pendidikan: pemberantasan buta huruf dan pendidikan politik. Kegiatan pemberantasan buta huruf untuk orang dewasa agaknya tidak diselenggarakan secara merata karena keterbatasan tenaga yang terlatih di bidang ini. Di tempat tertentu, kegiatan ini dijalankan oleh para aktivis organisasi perempuan OPMT dan khususnya ditujukan untuk kaum perempuan.²⁹ Juga ada zona tertentu yang menyelenggarakan kegiatan sekolah untuk anak-anak.³⁰

39. Kegiatan pendidikan yang paling merata adalah pendidikan politik. Fretilin memberikan perhatian yang besar pada pendidikan politik untuk kader dengan tujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam pengorganisasian masyarakat serta pengetahuan politik dan ideologis mereka. Komisariat setiap sektor menyelenggarakan apa yang disebut Pusat Pendidikan Politik (Centro da Formação Política, Ceforpol). Ceforpol harus diikuti oleh *quadro medio* ('kader menengah', yaitu para pengurus komite regional dan komite zona), tetapi kadang-kadang juga diikuti oleh *quadro inferior* ('kader rendah', para pengurus *suco* dan *aldeia*). Yang dicakup dalam pendidikan ini antara lain sejarah Timor-Leste sejak kolonialisme Portugis, teori tentang tahap-tahap perkembangan masyarakat, filsafat idealisme dan materialisme, membangun kekuasaan rakyat, prinsip 'garis massa' (*linha de massa*) dan 'sentralisme demokratis' (*centralismo democrático*) dalam pengorganisasian, emansipasi perempuan, dan produksi bahan makanan secara kolektif. Juga dibahas masalah-masalah yang

berhubungan dengan perkembangan perang dan strategi perang pembebasan nasional Timor-Leste, serta perang pembebasan nasional di negeri-negeri lain, seperti di Guinea-Bissau, Cina, dan Vietnam. Para pengajar dalam Ceforpol adalah anggota Komite Sentral Fretilin dan komandan militer Falintil.³¹ Secara keseluruhan Ceforpol berada di bawah tanggung jawab Departemen Orientasi Politik dan Ideologi (Departemento da Orientação Política e Ideológica, DOPI) yang merupakan satu badan dalam Komite Sentral Fretilin yang berwenang mengenai masalah ideologis.³²

40. Kegiatan pendidikan politik untuk masyarakat umum bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme dan mendukung perjuangan pembebasan nasional.³³ Para pengurus tingkat zona menyelenggarakan program 'pencerahan' (*esclarecimento*). Di tempat tertentu kegiatan ini dijalankan oleh *Brigada Dinamisadora* yang berkeliling ke permukiman-permukiman memberikan penjelasan tentang isi *Manual e Programa Políticos Fretilin* (Pedoman dan Program Politik Fretilin) dan perlunya bekerja untuk mendukung angkatan bersenjata Falintil yang berperang untuk merebut kemerdekaan.³⁴ Di tempat yang tidak ada *Brigada Dinamisadora*, kegiatan ini dilakukan oleh para *assistente zona*. Para aktivis OPMT juga giat melakukan kegiatan ini.³⁵ Biasanya pendidikan politik rakyat dijalankan bersama dengan kegiatan kebudayaan. Seorang anggota *Brigada Dinamisadora* memberikan kesaksiannya kepada Komisi:

*Setiap Brigada dikirim ke aldeia untuk mengajar pada siang hari. Pada malam hari acaranya adalah tebe dan dansa, juga melantunkan syair-syair tradisional serta menyanyikan lagu-lagu rakyat... Kata-kata yang dilantunkan dalam pantun-pantun dan lagu-lagu adalah tentang orang miskin dan penderitaan mereka karena invasi serta kenangan pada orang-orang yang mati karena berjuang demi tanah air. Kata-kata tersebut semakin membangkitkan simpati pada orang miskin dan tekad berjuang demi kemerdekaan tanah air.*³⁶

41. Kegiatan kebudayaan Fretilin diarahkan oleh suatu gagasan tentang pengembangan perasaan nasional, yaitu perasaan bahwa semua orang yang hidup di Timor-Leste adalah suatu bangsa yang hanya akan mencapai kemajuan jika berjuang membebaskan diri dari penjajahan. Tema orang miskin yang harus berjuang telah dikembangkan sejak sebelum terjadinya invasi Indonesia. Untuk itu, Fretilin mengambil lagu-lagu tradisional dari berbagai daerah dan memberinya syair-syair yang sesuai. Lagu-lagu juga dinyanyikan bersama dengan tari-tarian tradisional yang sesuai dengan semangat persatuan, seperti *tebe* dan *dahur*.

42. Kegiatan kebudayaan dibimbing oleh gagasan Fretilin tentang kesederajatan manusia. Bagi Fretilin, kolonialisme adalah bentuk ketidaksejajaran antarmanusia di mana suatu golongan minoritas manusia mengisap dan menindas mayoritas. Penindasan dan pengisapan ini tidak hanya terjadi antara penguasa kolonial terhadap rakyat Timor-Leste, tetapi juga terjadi di dalam masyarakat Timor-Leste sendiri, yaitu antara *liurai* (raja) terhadap rakyat kebanyakan, melalui berbagai bentuk

hubungan upeti dan kerja wajib. Ketidaksederajatan juga berlangsung dalam bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan akibat posisinya yang rendah dalam sistem masyarakat tradisional.³⁷ Fretilin memperkenalkan konsep ‘*camarada*’ yang memandang setiap orang sebagai kawan yang sederajat. Perlunya menghapuskan ketidaksederajatan akibat pengisapan dan penindasan dan menggantikannya dengan kesederajatan menjadi tema dalam lagu-lagu dan syair-syair yang dinyanyikan dalam berbagai kegiatan kebudayaan dan pemberantasan buta huruf.

Emansipasi perempuan

43. Emansipasi perempuan juga merupakan bagian dari program sosial-politik Fretilin. Kaum perempuan didorong untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, kesehatan, produksi pertanian, dan produksi barang-barang keperluan perang seperti keranjang (*lafatik* dan *luhu*) dan tas. *Crèche* (tempat pengasuhan anak) didirikan agar memungkinkan perempuan terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Orang dewasa laki-laki dan perempuan diatur dalam giliran mengasuh anak-anak di *crèche*. *Crèche* juga menjadi tempat mendidik anak-anak agar menjadi nasionalis yang berjiwa revolusioner melalui lagu-lagu perjuangan, syair-syair, dan teater.³⁸

44. Di beberapa tempat diselenggarakan kursus untuk mempersiapkan perempuan yang akan menikah. Misalnya, OPMT di Zona Modok, Sektor Centro Norte, menyelenggarakan kursus ini. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang nasionalis dan menghargai hak laki-laki dan perempuan. Para calon pengantin diberi penjelasan tentang konsep emansipasi perempuan. Adat *barlaque* yang mengharuskan pertukaran barang dalam jumlah dan jenis tertentu antara keluarga calon pengantin perempuan dan laki-laki, yang dinilai merendahkan kaum perempuan, ditafsirkan-ulang dan ditegaskan nilainya sebagai simbol penghormatan pada martabat perempuan. Melalui kursus ini para calon pengantin juga belajar untuk menentang sikap-sikap dan prakonsepsi kolonialis dan feodalis mengenai perempuan, serta untuk membela martabat perempuan dan laki-laki.³⁹

Sistem peradilan

45. Fretilin menyelenggarakan suatu bentuk peradilan untuk menangani orang-orang yang melakukan kesalahan. Cara mengadili orang ditentukan oleh jenis kesalahannya. Untuk kesalahan yang dianggap ringan, seperti memaki orang lain, mengganggu perempuan (*bok fetó*), dan mencuri barang, dilakukan proses yang disebut ‘kritik-otokritik’ (*critica-auto critica*). Dalam proses ini, orang yang disangka melakukan kesalahan dipersilakan mengakui kesalahannya di depan khalayak yang jumlahnya tidak besar, kemudian menyatakan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian ia dimaafkan setelah menjalani hukuman ringan, misalnya mencari kayu bakar atau menimba air untuk keperluan dapur umum selama dua hari. Hukuman ini disebut ‘keadilan koreksi’ (*justo correctivo*).

46. Untuk kesalahan yang berat, proses yang dijalankan adalah yang disebut ‘pengadilan rakyat’ (*justiça popular*). Yang tergolong kesalahan berat adalah melakukan kontak dengan musuh, bekerjasama dengan musuh (misalnya dengan menjadi mata-mata), menyerahkan penduduk sipil kepada musuh, dan berkhianat. Mereka dianggap menentang politik Fretilin. Orang yang disangka melakukan kesalahan ditampilkan di atas panggung di depan sejumlah besar hadirin. Yang mengajukan dakwaan adalah komandan militer yang menangkap orang yang dianggap melakukan kesalahan berat tersebut. Yang memutuskan kesalahan tersangka adalah rakyat yang hadir, sementara komisaris politik, atau kadang-kadang bersama komandan sektor, menetapkan hukumannya.⁴⁰ Bentuk hukuman berbeda-beda, dari hukuman mati sampai “rehabilitasi” di lembaga yang disebut Rehabilitasi Nasional (*Reabilitação Nacional, Renal*). *Renal* adalah “tempat untuk merehabilitasi orang yang reaksioner menjadi revolusioner”⁴¹ dan berada di bawah wewenang komisiariat sektor. Jumlah *Renal* di setiap sektor tidak sama (lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan).*

47. Rehabilitasi diperuntukkan bagi orang-orang yang meskipun melakukan kejahatan berat dianggap bisa menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri.⁴² Dalam tempat rehabilitasi ini pada siang hari mereka diharuskan melakukan kerja produksi pertanian, seperti berkebun dan bersawah dan kerja-kerja lainnya seperti mengangkut hasil pertanian, mencari kayu bakar, menimba air. Hasil kerja kebun atau sawah itu selain digunakan untuk keperluan makan mereka sendiri juga untuk keperluan Falintil.⁴³ Pada malam harinya mereka diharuskan mengikuti pendidikan politik. Ada juga *Renal* yang menjalankan pemberantasan buta huruf.⁴⁴

48. Sedikitnya ada dua jenis tempat penahanan di *Renal*. Pertama, lubang di tanah yang dibuat untuk itu, dengan bagian atasnya ditutup dengan terali dari kayu atau ditutup dengan kayu yang di atasnya dipasang batu besar. Lubang ini ukurannya berbeda-beda, ada yang tingginya hanya 80 cm sehingga orang yang dimasukkan ke dalamnya harus duduk di tanah, ada juga yang kedalamannya tiga meter, seperti di *Renal* Nundamar (Remexio, Aileu).⁴⁵ Jenis kedua adalah tempat penahanan di atas tanah yang dikelilingi dengan tembok yang dibuat dari batu yang disusun setinggi 2 – 3 meter.⁴⁶

49. Ada kasus-kasus di mana orang tidak diberi makan atau minum selama beberapa hari di dalam tahanan *Renal*. Kadang-kadang keluarga bisa memberi bantuan makanan dan minuman, tetapi kadang-kadang ini juga tidak diperbolehkan. Alexandrino de Jesus, seorang prajurit Falintil yang ditangkap karena dituduh mau menyerah kepada tentara Indonesia, mengungkapkan kepada Komisi pengalamannya dalam *Renal*:

*Kami dibawa ke tempat rehabilitasi di Sau Kata di Suco Ura Hou
[Hatulia, Ermera]. Kami disuruh bekerja, tanpa dibekali alat-alat*

.....
* *Renal* berada di bawah tanggung jawab langsung seorang *adjunto*. Misalnya *Renal* di Nundamar, Remexio, berada di bawah tanggung jawab *Adjunto* Sebastião Montalvão (“Lais”). [Wawancara CAVR dengan António Amado de Jesus Guterres, Manatuto, 11 Desember 2003; Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004.]

pertanian, dengan kondisi fisik kami yang lemah. Waktu itu mereka menyuruh kami mencabut rumput seluas satu setengah hektar untuk menanam jagung. Selama kami bekerja di situ tidak diberi makan. Kami membagi kelompok kami dalam dua regu; satu regu bekerja mencabut rumput, satu regu yang terdiri atas empat orang termasuk saya mencari ubi kayu [untuk makanan kami]. Kebetulan di sekitar situ banyak ubi kayu. Selama bekerja kami dikawal oleh delapan orang anggota Falintil secara bergantian. Kami tidur di tempat kami bekerja hingga satu minggu, setelah itu kami wajib lapor ke Fatubessi [Ermera]. Tidak ada yang mati.

Di tempat rehabilitasi kami selama satu setengah bulan. Setelah menanam jagung, ada panggilan dari komandan Sektor Fronteira Norte Filomeno Paixão. Setelah kami di sana [di pusat komando sektor di Fatubessi] kami diperlakukan dengan baik, disuruh baris untuk menerima ransum. Mulai saat itu kami diterima kembali menjadi anggota Falintil.⁴⁷

50. Orang yang kasusnya menunggu disidangkan di pengadilan rakyat atau *justiça popular* juga ditahan di *Renal*. Interogasi adalah metode utama dari investigasi dan sejumlah tahanan mengalami penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan.⁴⁸ Eduardo de Jesus Barreto dari sektor Fronteira Norte mengemukakan kesaksiannya kepada Komisi:

Yang saya lihat sendiri waktu itu Comandante Região Martinho mereka kuburkan ke dalam sebuah lubang dengan posisi berdiri setengah badan tanpa pakaian dan tangannya diikat, kemudian mereka membakar ban mobil lalu meneteskan ke badannya. Karena saya tidak tahan melihat perlakuan itu, saya menghindar.⁴⁹

51. Tidak semua kasus berat dilakukan pemeriksaan. Ada kasus-kasus di mana seseorang dicurigai punya rencana untuk menyerah atau menjadi mata-mata Indonesia, kemudian dituduh oleh komandan setempat dan putusan pun diambil. Seorang mantan asisten politik mengungkapkan kepada CAVR:

...orang yang bersalah dibawa ke depan umum. Setelah di sana banyak orang yang mengatakan bahwa dia salah, tidak ada orang yang membantah meskipun kita berbuat benar, tidak ada hakim yang membela kita. Saya pernah menyaksikan kurang lebih tiga kasus. Orang dicurigai dan ditangkap di zona gerilya, ditangkap di situ, oleh komandan dituduh sebagai mata-mata. Sampai di sana komandan itu berkata "orang ini kami tangkap di zona gerilya. Ini mata-mata." Rakyat mengatakan, "Kalau dia mata-mata, dia harus mati." Kasus-kasus seperti ini biasanya yang menangani adalah komandan Falintil dan rakyat hanya mengikuti apa tuduhannya.⁵⁰

52. Oleh karena itu juga terjadi orang dijatuhi hukuman untuk suatu kejahatan yang tidak dilakukannya. Salah satu kasus dikemukakan oleh seorang kader:

...begini ada orang yang mereka [para komandan] sudah nggak suka sama [orang-orang] yang waktu itu turun ke kota. Keluarga mereka itu dicurigai, kemudian bisa diapa-apakan, atau disiksalah. Saya menentang itu, saya bilang, "Jangan, karena mereka yang sudah turun ke kota berarti sudah nggak mau lagi dengan perjuangan kita, ngapain keluarga mereka harus di ini, itu." Saya selalu menentang itu, waktu itu saya dituduh ada hubungan, ada kontak atau mengkhianati perjuangan. Akhirnya saya dipenjara tanpa alasan yang jelas. Saya nggak disiksa. Cuma pernah di dalam lubang tanah beberapa bulan.⁵¹

Strategi

53. Strategi resistansi yang dilancarkan oleh Fretilin berkisar pada pandangan bahwa gerakan ini sedang melancarkan perang revolusioner untuk kemerdekaan. Konsepsi tentang revolusi terkait dengan kemerdekaan, tetapi gagasan Fretilin tentang kemerdekaan bukan semata-mata perangnya penguasa kolonial Portugis untuk digantikan dengan pemerintah oleh orang Timor-Leste sendiri. Bagi Fretilin kemerdekaan tanpa perubahan pada struktur masyarakat akan berarti penggantian satu tuan penjajah dengan tuan penjajah yang lain. Kemerdekaan bagi Fretilin adalah terciptanya suatu kesederajatan antarmanusia dengan "mengakhiri ketidakseimbangan situasi kolonial yang didasarkan pada eksploitasi oleh suatu minoritas terhadap mayoritas. Minoritas kolonial dan kaum kaya mengisap mayoritas."⁵² Bagi Fretilin, proses penghapusan struktur sosial kolonial itu adalah revolusi.⁵³

54. Pedoman dan Program Politik Fretilin (*Manual e Programa Políticos Fretilin*) yang dikeluarkan sekitar September 1975 menyebutkan:

[Fretilin] disebut revolusioner karena supaya rakyat Timor hidup sejahtera, untuk pembebasan yang sejati, Rakyat harus mengubah, mentransformasi, MEREVOLUSIONERKAN seluruh struktur yang telah berlangsung selama 500 tahun. Kita harus melakukan transformasi besar-besaran dengan menciptakan struktur-struktur baru untuk melayani Rakyat Timor. Kalau kita tidak menghapuskan struktur-struktur yang menyengsarakan kita dan menggantikannya dengan struktur-struktur baru, Rakyat Timor tidak akan bisa hidup sejahtera.

.....
* Pasal 2 Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste menyatakan bahwa: "Republik Demokratik Timor-Leste dipimpin berdasarkan orientasi politik FRETILIN yang diarahkan untuk menghapuskan struktur-struktur kolonial demi menciptakan sebuah masyarakat baru yang bebas dari segala bentuk penguasaan dan pengisapan." Fretilin juga menganggap bahwa situasi kolonial bisa terjadi dalam bentuk baru ketika negara sudah mendapatkan kemerdekaan, yaitu jika modal asing menguasai ekonomi Timor-Leste. Situasi ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang disebut 'neokolonialisme' yang ingin dicegah oleh Fretilin (*Manual e Programa Políticos Fretilin*, bagian Manual butir 5).

Rakyat Timor tidak akan memperoleh Kemerdekaan, hanya sedikit orang yang hidup sejahtera, seperti yang terjadi sampai sekarang ini. Rakyat banyak sekali yang hidupnya tetap menderita.⁵³

55. Fretilin menganggap struktur masyarakat tradisional juga menindas. Dalam struktur masyarakat tradisional, *liurai* memegang kekuasaan atas rakyat, dengan membebani rakyat untuk melakukan kerja wajib kepadanya dan membayar upeti. Kaum penguasa kolonial juga memanfaatkan status tradisional *liurai* untuk pengerahan penduduk untuk bekerja pada perkebunan-perkebunan yang menghasilkan barang-barang pertanian untuk ekspor.^{*} Fretilin menganggap kekuasaan *liurai* sebagai feodalisme dan menginginkan penghapusannya.

56. Kolonialisme dan tradisi juga dianggap punya sifat menindas yang khusus terhadap kaum perempuan. Fretilin menganggap bahwa perempuan Timor mengalami penindasan ganda, yaitu penindasan kolonial umum yang dialami semua orang Timor-Leste dan penindasan khusus terhadap perempuan akibat dari konsepsi tradisional tentang perempuan dan “sikap kolonialis terhadap perempuan.”⁵⁴ Sementara penindasan umum kolonial antara lain berupa kerja paksa, upah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan, dan rasisme, maka penindasan khusus terhadap perempuan menjadikan perempuan sebagai “alat kenikmatan bagi majikan kolonialis” dan sebagai “barang milik” yang dipertukarkan dalam praktik *barlaque* serta poligami. Fretilin menghendaki penghapusan penindasan ini. Program revolusioner Fretilin mencakup “pembebasan perempuan sebagai makhluk sosial.”⁵⁵

57. Untuk menciptakan struktur baru yang bebas dari penindasan, Fretilin melancarkan berbagai program sosial-politik sejak sekitar September 1974. Bidang yang dianggap paling penting oleh Fretilin adalah pertanian, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.⁵⁶ Fretilin memandang bahwa di bidang pertanian, kolonialisme telah mempermiskin rakyat Timor-Leste dengan mengembangkan pertanian yang mengutamakan tanaman ekspor. Akibatnya rakyat mengalami kelaparan akibat kurangnya bahan makanan maupun karena terbatasnya jenis bahan makanan.⁵⁷ Fretilin berusaha melakukan pengembangan pertanian yang melayani rakyat, yaitu yang memungkinkan “semua orang bisa mendapatkan makanan yang baik agar kesehatannya baik, agar seluruh rakyat bisa hidup sejahtera.”⁵⁸ Sistem pemilihan dan organisasi di bidang pertanian yang dianggap cocok untuk itu adalah koperasi.[†] Fretilin merencanakan membangun koperasi produksi, distribusi, dan konsumsi di seluruh negeri. Ketika Timor-Leste masih berada di bawah kekuasaan Portugis, Fretilin mempraktikkan ide ini di beberapa tempat, antara lain di Bazartete (Liquiçá) dan di Bucoli (Baucau), masing-masing adalah desa asal Nicolau Lobato dan Sahe, yang memelopori proyek-proyek ini.⁵⁹

.....
^{*} Tenaga kerja paksa ini disebut *auxiliar* ('pembantu') yang oleh orang pribumi dilafalkan menjadi 'assuliar'.

[†] Fretilin juga merencanakan program perombakan pemilikan tanah (reformasi agraria) dengan menyita perkebunan-perkebunan besar untuk digarap oleh koperasi-koperasi rakyat (*Manual e Programa Políticos Fretilin*, bagian *Programa Políticos*, butir 2.B.1).

58. Di bidang pendidikan, Fretilin menjalankan program alfabetisasi dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh pendidik asal Brasil, Paulo Freire.* Pendidikan dianggap penting karena bagi Fretilin kemerdekaan akan terwujud bila rakyat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan bangsa dan rakyat bisa berpartisipasi aktif jika tahu apa yang diinginkannya dan mengapa menginginkannya. Bila rakyat hidup dalam ketidaktahuan, akan selalu ada pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan dan kebodohnya untuk mengeksploitasi mereka. Menurut perspektif Fretilin, pendidikan yang berlangsung di bawah pemerintah Portugis adalah kebalikan dari yang dibutuhkan rakyat.⁶⁰ Metode *conscientização* Freire dipilih karena dengan metode ini rakyat tidak hanya belajar membaca dan menulis tetapi juga menjalani proses “penyadaran” politik tentang penindasan kolonial yang mereka alami dan bagaimana mencari jalan keluar darinya. Program alfabetisasi yang persiapannya dimulai Mei 1974, mulai dijalankan sejak Januari 1975.⁶¹

59. Bidang kesehatan dipandang sangat terkait dengan pendidikan. Fretilin memandang bahwa rendahnya tingkat kesehatan rakyat disebabkan oleh rendahnya pengetahuan rakyat tentang kesehatan dan tentang nilai gizi makanan. Ketidaktahuan (*igonorancia*) dan ketidakmengertian (*obscurantismo*) yang merupakan produk dari situasi kolonial dianggap sebagai sumber masalahnya. Oleh karena itu, bagi Fretilin pendidikan kesehatan merupakan salah satu pemecahan masalahnya.⁶²

60. Gagasan kebudayaan Fretilin berhubungan erat dengan pengembangan suatu kesadaran nasional di kalangan rakyat Timor-Leste. Kesadaran nasional adalah sesuatu yang baru. Pada zaman kolonial, umumnya rakyat memahami dirinya sebagai anggota komunitas suatu *suco*, suatu kerajaan tertentu, atau suatu kelompok etnolinguistik tertentu. Misalnya orang memandang dirinya sebagai orang Turiscai, atau anggota kelompok etnolinguistik Mambae, ketimbang sebagai orang Timor-Leste dan memandang orang dari luar, bahkan orang yang berasal dari Dili, sebagai orang asing (*malae*).⁶³ Fretilin berusaha mengembangkan kesadaran nasional melalui program kebudayaan dengan memperkenalkan satu bentuk kebudayaan yang dikenal di satu tempat saja ke tempat-tempat lain dan berusaha menjadikannya sebagai milik seluruh rakyat Timor-Leste. Misalnya tarian *tebe* dari satu tempat diperkenalkan dalam program alfabetisasi di tempat-tempat lain. Demikian pula lagu-lagu, seperti “Kolele Mai” yang berasal dari suatu desa di Baucau diperkenalkan ke seluruh negeri. Fretilin juga yang menggunakan bahasa Tetum, yang merupakan bahasa perhubungan di seluruh wilayah ini, dalam pertemuan-pertemuan mereka.

61. Fretilin yakin bahwa revolusi bisa dijalankan melalui jalan damai karena dua sebab.† Pertama, semakin jelas bahwa politik dekolonisasi Portugis arahnya lebih

.....
* Fretilin berperan penting dalam perubahan kebijakan pemerintah Portugis mengenai pendidikan ketika pemerintah kolonial di bawah Gubernur Mário Lemos Pires membentuk Komite Pendidikan yang bertugas melakukan reformasi pada masa dekolonisasi. [Helen Hill, *Stirrings of Nationalism in East Timor*, hal. 122.]

† Francisco Xavier do Amaral (wawancara dengan CAVR, 18/6/2004) menyatakan bahwa Fretilin berharap Portugal “mau menyerahkan [kemerdekaan Timor-Leste] secara damai” dan oleh karena itu tidak ada rencana dalam Fretilin untuk melakukan perjuangan bersenjata. Menurutnya, aksi bersenjata hanya dilakukan setelah terjadinya aksi bersenjata Gerakan Bersenjata 11 Agustus oleh UDT. [Wawancara CAVR

condong ke kemerdekaan pada saat Fretilin menulis programnya pada November 1974. Ini membuat Fretilin yakin bahwa kolonialisme sudah bangkrut dalam pengertian politik maupun administrasi.⁶⁴ Kedua, Fretilin semakin populer di kalangan rakyat karena program-program sosial-politiknya.⁶⁵ Misalnya, dalam pemilihan umum lokal untuk memilih kepala desa yang diselenggarakan Mei 1975 di sejumlah desa di Lospalos (Lautém), mayoritas kepala desa yang terpilih adalah pendukung Fretilin.⁶⁶ Menurut Francisco Xavier do Amaral, peningkatan popularitas ini membuat para pemimpin Fretilin yakin bahwa mayoritas rakyat menginginkan kemerdekaan dan dengan mudah mereka akan mengalahkan ide federasi dengan Portugal maupun integrasi dengan Indonesia, tanpa perjuangan bersenjata.⁶⁷ Bagi Fretilin, cara untuk melancarkan revolusi adalah dengan memobilisasi kekuatan rakyat untuk melancarkan program-program pertanian, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.*

62. Program-program sosial-politik yang dijalankan di hutan setelah invasi Indonesia adalah kelanjutan dari program yang telah dijalankan sampai sebelum terjadinya 'Gerakan Bersenjata 11 Agustus'. Bedanya, dengan terjadinya perang, program-program tersebut sekarang dijalankan dalam kerangka *base de apoio* untuk mendukung perang. Dalam perjalanan perang, Fretilin sendiri mengalami radikalisasi, dengan semakin menegaskan penghapusan kelas-kelas dalam masyarakat, dan mendeklarasikan Marxisme sebagai ideologinya.†

Perang rakyat jangka panjang

63. Pada mulanya, seperti dikemukakan di atas, perang dilakukan sebagai suatu reaksi yang spontan dan tidak tersentralisasi terhadap serangan tentara Indonesia, tanpa suatu strategi menyeluruh yang jelas. Pada sidang pleno kedua Komite Sentral Fretilin di Soibada (Manatuto), yang diselenggarakan pada 15 Mei-2 Juni 1976, Fretilin mengadopsi strategi 'Perang Rakyat Jangka Panjang'.‡ Fretilin memandang

dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004.] Terra Mau Bulak menyebutkan dibentuknya *Exercito de Libertação Maubere* di kalangan orang Timor-Leste yang berdinasi dalam tentara kolonial Portugis oleh sejumlah anggota Komite Sentral Fretilin sekitar Mei 1975. [Terra Maubulak, Arsip Proyek Sejarah Lisan *Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No. 18.] Tetapi ini dibantah oleh Mari Alkatiri (yang pada saat itu menjabat Komisaris Politik Nasional) dan Francisco Xavier do Amaral (Ketua Fretilin). [Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004; Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004.]

* Helen Hill menyebutkan bahwa Fretilin mencari "alternatif damai terhadap perang gerilya, yaitu penggalangan kekuatan rakyat untuk melawan struktur-struktur kolonial." [Helen Hill, *Stirrings of Nationalism in East Timor*, hal. 159.]

† Menurut Xanana Gusmão, Marxisme dinyatakan sebagai ideologi Fretilin dalam Konferensi Laline 1977. Konferensi ini tidak dihadiri oleh Ketua Fretilin Francisco Xavier do Amaral. Sumber lain menyebutkan bahwa dalam konferensi tersebut, Marxisme tidak jadi ditetapkan sebagai ideologi resmi akibat ketidakhadiran Xavier do Amaral. [Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 11 Mei 2004.] Tetapi para kader yang mengikuti pendidikan politik Ceforpol mengingat bahwa mereka belajar tentang Marxisme dalam kelas-kelas Ceforpol. [Lihat misalnya, Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004; Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan *Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR.]

‡ Strategi ini dirumuskan oleh Mao Tse Tung berdasarkan pengalaman perang resistansi Cina menghadapi imperialisme Jepang (Mao Tse Tung, *On Protracted War*, 1938, diterbitkan kembali dalam

bahwa perang ini tidak akan bisa dimenangi dengan mudah dan cepat karena kekuatan Indonesia yang sangat jauh lebih besar dari segi militer maupun ekonomi.⁶⁸ Karena itu, jika Timor-Leste menginginkan kemerdekaan, perang akan berlangsung lama dan keras. Berdasarkan analisis tentang keadaan politik internasional, Fretilin menyimpulkan bahwa Timor-Leste tidak bisa mengandalkan bantuan asing untuk mencapai kemenangan.*

64. Tiga prinsip utama yang diadopsi dalam Konferensi Soibada adalah: perang harus dilancarkan oleh dan untuk rakyat, perang itu berlangsung dalam jangka panjang, dan Timor-Leste harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Berdasarkan strategi tersebut, perang tidak dipandang semata sebagai konflik militer antara dua angkatan bersenjata, tetapi dipandang sebagai perang rakyat. Jika dalam pandangan militer murni, kekuatan yang menentukan dalam perang adalah militer dan ekonomi. Tetapi Fretilin yakin bahwa kekuatan dan tekad dari rakyat adalah faktor menentukan dan semangat juang ini bisa terus-menerus diperkuat melalui pendidikan dan mobilisasi.

65. Dalam strategi 'Perang Rakyat Jangka Panjang', *base de apoio* berperan sentral. Basis ini tidak hanya memberikan dukungan logistik perang untuk kekuatan bersenjata, tetapi dalam basis inilah dibangun kekuatan rakyat melalui pendidikan dan mobilisasi.⁶⁹ Egas da Costa, seorang *assistente* untuk seksi agitasi dan propaganda di salah satu zona yang termasuk dalam Sektor Centro Leste, mengatakan:

Karena perang ini adalah perang jangka panjang, di basis rakyat dididik, dilatih, agar bisa menjalankan pandangan hidup yang baru.⁷⁰

66. Fretilin menganggap serbuan militer Indonesia adalah serbuan terhadap rakyat Timor-Leste yang sedang membebaskan diri dari penindasan manusia terhadap manusia. Dalam melakukan serbuan itu, Indonesia dianggap bertindak sebagai kakitangan kekuatan imperialis dunia. Dokumen dari Departemen Orientasi Politik dan Ideologi yang disahkan pada Konferensi Laline 1977 menyebutkan:

Akan tetapi pengalaman negeri-negeri lain dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonial, dan pengalaman kita sendiri, memperlihatkan bahwa gerakan seperti itu menghadapi kekerasan total kekuatan imperialis, dan bahwa satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh gerakan nasionalis yang sejati untuk melindungi rakyat dari genosida atau pembantaian besar-besaran, adalah mengorganisasi, memobilisasi,

Selected Works of Mao Tse-tung [Peking: Foreign Languages Press, 1965]). Agaknya sebagian pemimpin Fretilin mempelajari strategi ini dari bahan bacaan yang berasal dari gerakan pembebasan nasional Afrika di negara-negara jajahan Portugis.

* Ide untuk minta bantuan dari negara-negara Barat ditolak karena negara-negara itu adalah "imperialis" yang justru merupakan lawan bagi bangsa-bangsa yang ingin mendapatkan "kebebasan sejati." Indonesia yang melancarkan agresi militer dipandang sebagai kakitangan Amerika Serikat, yang merupakan pemimpin kekuatan imperialis di dunia. Sementara itu, gagasan untuk meminta bantuan negara-negara blok sosialis juga ditolak dengan alasan bahwa bantuan tersebut akan mengikat di kemudian hari. [Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004.]

dan mendidik rakyat untuk bekerja, khususnya bagi pengusiran penuh dan lengkap kekuatan penyerbu dan mengalahkan imperialisme.⁷¹

67. Perang dianggap sebagai perang seluruh rakyat menghadapi kekuatan penyerbu yang menjalankan kepentingan imperialis. Dengan mengorganisasi, memobilisasi, dan mendidik rakyat akan tercipta suatu kekuatan besar rakyat yang tak akan terkalahkan menghadapi agresi imperialis tersebut. Hubungan rakyat dengan tentara dilambangkan sebagai “air dengan ikan” yang berarti bahwa rakyat adalah air, tempat yang memungkinkan tentara hidup.⁷²

68. Dalam bentuk nyatanya, rakyat memberikan makanan kepada tentara Falintil dan menjadi sumber tenaga bagi angkatan bersenjata. Sebaliknya, Falintil dipandang sebagai pelindung rakyat (*limankroatpovo*) yang memungkinkan rakyat mewujudkan kehidupan tanpa penindasan dan pengisapan di *zonas libertadas*.⁷³ Falintil berada di bawah komando Fretilin, yang merupakan pelopor atau pemimpin (*mata dalam*) dalam perjuangan pembebasan rakyat. Prinsip yang mengatur hubungan ini adalah ‘politik memerintah senjata’ (*a politica comanda fuzil*). Menurut Taur Matan Ruak, “Falintil ibarat sebilah pisau, yang digunakan oleh politik untuk memotong.”⁷⁴

Konflik internal

69. Pada periode *zonas libertadas* ini terjadi pertentangan di kalangan pemimpin Fretilin. Sebelumnya, pertentangan tersebut digambarkan sebagai pertentangan yang terjadi di antara kelompok-kelompok ideologis dalam tubuh Fretilin. Pandangan ini menyatakan bahwa di dalam Fretilin terdapat kelompok nasionalis, sosial-demokrat, dan Marxis atau bahkan Maois,^{*} dan bahwa pertentangan itu dimenangi oleh kelompok Marxis atau kelompok radikal.⁷⁵ Keterangan yang diperoleh Komisi memberikan gambaran berbeda tentang perbedaan ideologis yang berpusat pada strategi militer. Perbedaan ini terungkap dalam beberapa masalah seperti bagaimana prinsip ‘politik memerintah senjata’ diterapkan, ide tentang ‘bunuh diri ideologis’ (*suicidio ideológico*), dan keberadaan penduduk di wilayah yang dikuasai Fretilin.

* Egas da Costa Freitas memberikan kategorisasi yang agak lain, yaitu sosialis, sosial demokrat, dan ‘kanaan agak fasis’. [Wawancara CAVR dengan Egas da Costa, Dili, 19 Mei 2004.] Agaknya, yang kali pertama menyebutkan adanya “kelompok-kelompok” dalam Fretilin adalah Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War against East Timor* (London: Zed Books Ltd., 1984). Menurut mereka, dalam Fretilin ada empat kelompok, yaitu kelompok bawahan anticolonial, kelompok Casa dos Timores, ‘kelompok sekitar Xavier do Amaral’, dan ‘kelompok sekitar Alarico Fernandes’ (hal. 53-54). Kemudian menyusul John G. Taylor (*Indonesia’s Forgotten War: The Hidden History of East Timor* [London: Zed Press, 1991]) dengan pengelompokan yang berbeda, yaitu: ‘kelompok sosial-demokrat’ (yang diwakili oleh José Ramos-Horta, Justino Mota, Alarico Fernandes, dan Francisco Xavier do Amaral), kelompok “yang menggabungkan nasionalisme anticolonial yang keras dengan kemandirian ekonomi dan kemajuan politik” (Nicolau Lobato dengan dukungan para sersan mantan tentara Portugis), dan kelompok ‘nasionalis-Marxis’ sekitar Mau Lear dan Sahe (dalam versi revisi *East Timor The Price of Freedom* [London and New York: Zed Books, 1999], hal. 46-48).

Politik memerintah senjata

70. Pertentangan pertama terjadi seputar penerapan prinsip ‘politik memerintah senjata’. Menurut kesaksian Lucas da Costa kepada Komisi, penolakan terhadap prinsip ini sudah terjadi setelah Fretilin melancarkan “kontra-kup” pada Agustus 1975.⁷⁶ Pada waktu itu, tidak lama setelah Fretilin berhasil mengontrol seluruh wilayah Timor-Leste, wewenang para komandan militer, yang kebanyakan mantan tentara Portugis, secara *de facto* lebih besar daripada wewenang pemimpin politik.’ Penerapan prinsip ‘politik memerintah senjata’ membuat wewenang mereka berkurang. Ketidakpuasan mereka diperbesar oleh kenyataan bahwa banyak dari pemimpin politik yang memiliki pengetahuan dan pengalaman militer yang lebih rendah dibandingkan mereka. Lucas da Costa (Rama Metan) mengemukakan kesaksiannya kepada Komisi:

Ketika Fretilin menguasai wilayah, mulai terasa gesekan-gesekan antara angkatan bersenjata Fretilin dengan beberapa komandan terutama di Dili sini. Puncaknya terjadi pada bulan Oktober.

Di Fretilin waktu itu berlaku sebuah prinsip, ‘A política comanda fuzil’ artinya politik yang mengendalikan kekuatan bersenjata. [Prinsip itu] berlaku sejak kita kuasai, yang mengeluarkan Komite Sentral Fretilin. Nah, karena prinsip itu, sebagian dari komandan-komandan kompi merasa wewenangnya berkurang karena mereka harus tunduk pada politik, padahal merekalah yang mempunyai kekuatan bersenjata; prajurit dan mereka merasa gelisah berhubungan dengan beberapa anggota Komite Sentral Fretilin yang masih muda usianya atau masih minim pengalaman.⁷⁷

71. Masalah ini terus berlanjut di hutan setelah invasi, yang memuncak dalam berbagai insiden seperti kematian Wakil Kepala Staf Falintil, José da Silva. José da Silva adalah sersan dalam angkatan bersenjata kolonial Portugis dan komandan kompi pertama Falintil pada Agustus 1975. Selanjutnya oleh Fretilin ia ditunjuk menjadi Wakil Kepala Staf (*Sub Chefe do Estado Maior*) Falintil. Setelah terjadi invasi, ia bertempur di wilayah Ermera, yang kemudian termasuk dalam Sektor Centro Norte. Pertentangan dengan pemimpin Fretilin terjadi setelah Konferensi Soibada. Hélio Pina (Maukruma), yang dipilih menjadi komisaris politik dibantu oleh Antonio Carvalho (Fera Lafaek), diberi tugas melakukan melaksanakan restrukturisasi sipil dan militer yang diputuskan pada konferensi itu. José da Silva tidak menerima restrukturisasi tersebut dan menangkap Maukruma serta sejumlah komandan yang setia padanya. Selanjutnya terjadi pertempuran dan kemudian José da Silva ditangkap serta ditahan. Ia dieksekusi pada sekitar pertengahan 1977.⁷⁸

* Menurut Jill Jolliffe, pada waktu itu sepasukan polisi militer menempatkan penghalang jalan di seputar Dili dan mengirimkan delegasi kepada pimpinan Fretilin untuk menuntut penangkapan sejumlah militan Fretilin yang dianggap komunis. Insiden ini diselesaikan melalui suatu diskusi selama empat jam pada 4 November yang berhasil meyakinkan para prajurit itu bahwa tuduhan mereka salah. (Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism*, hal. 185-186).

72. Agaknya pertentangan mengenai prinsip kontrol sipil atas urusan militer juga merupakan faktor dalam eksekusi terhadap Agostinho Espirito Santo (seorang komandan di Sektor Fronteira Norte), Aquiles Freitas (seorang komandan di sektor Centro Leste), dan Martinho Soares.*

Suicido ideológico

73. Ide Fretilin tentang revolusi juga menimbulkan pertentangan. Karena revolusi bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas, orang-orang yang berasal dari kelas atas dalam masyarakat, misalnya *liurai*, diharuskan meninggalkan status istimewanya dalam masyarakat dan melakukan bunuh diri ideologis atau *suicido ideológico*. Seperti dikemukakan oleh Xanana Gusmão:

Revolusi itu komunisme, tidak ada kelas, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada eksploitasi, semua orang sama. Revolusi itu untuk mulai menghilangkan semua hal itu mengikuti ideologi komunis...supaya tidak ada kelas, kita semua sama, harus bunuh diri, yang di atas turun duduk bersama rakyat.⁷⁹

74. Di *zonas libertadas* sikap-sikap yang bertentangan dengan politik Fretilin ini digolongkan sebagai 'reaksioner' dan termasuk dalam kejahatan yang berat.⁸⁰ Menurut Xanana Gusmão, jika seseorang melakukan tindakan yang digolongkan reaksioner dan tidak menghentikan tindakan tersebut melainkan justru terus melakukannya, ia dianggap 'pengkhianat'.⁸¹

75. Pembunuhan Aquiles Freitas agaknya berkaitan dengan masalah ini. Aquiles Freitas adalah komandan di Atabae ketika Indonesia melakukan serbuan-serbuan di perbatasan pada Oktober – November 1975. Dalam dinas militer Portugis, pangkat terakhirnya adalah sersan satu (*sargento*). Setelah invasi terhadap Dili pada 7 Desember 1975, ia menjadi komandan Zona Borokere di Quelicai, kampung halamannya. Selanjutnya ia diangkat menjadi Komandan Kedua Region Baucau, sementara yang menjadi Komandan Pertama adalah Reinaldo Correia (Kilik Wae Gae). Rupanya Aquiles Freitas tidak menerima ditempatkan di bawah Kilik Wae Gae, yang ketika berdinasi dalam tentara kolonial Portugis hanya berpangkat prajurit (*soldado*), yang lebih rendah daripada dirinya.⁸² Seorang mantan pengurus Fretilin di zona Uato Carbau (Viqueque) mengatakan kepada Komisi bahwa Aquiles Freitas tidak bisa menyembunyikan sikap melecehkan terhadap Fretilin dan Falintil:

...dia sempat berkunjung ke kantor zona kami, Zona Furak Kaun. Saya di sana, saya sudah Vice Secretário. Memang aneh, orang itu ke sana dia hanya menghubungi ini, katakanlah orang-orang tertentu ya, zona dia nggak pernah berurusan. Karena dia kelihatan dari omongannya itu bahwa, "Apa itu Falintil!?" Dia kelihatannya sangat melecehkan

* Menurut Lucas da Costa, Comandante Agostinho Espirito Santo sering bertentangan dengan Komisaris Politik César Mau Laka. [Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.]

Falintil. Akhirnya kan dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia memang antirevolusi. Dan waktu itu saya sebagai Vice Secretário, dia tidak pernah datang. Kita dilecehkan sebagai aparat di sana. Mangkanya saya berani mengatakan dia ini antirevolusi.

Dia [Aquiles] ke Uatu Carbau itu tahun 1976, kalau saya tidak salah, sekitar tahun 1976 atau 1977... Waktu saya ke sana saya masih Assistente Uatu Carbau...saya ketemu dia gitu, saya tahu betul bahwa dia ke sana dia nggak pernah menghargai bahwa itu ada sekretaris, ada wakil sekretaris, ada pengurus, assistente. Itu nggak pernah gitu. Yang saya dengar itu, dia bilang, "Ahh, Falintil itu apa sih?"⁸³

76. Eksekusi terhadap Francisco Hornay adalah contoh lain pertentangan mengenai ini. Persoalan bermula dari pelaksanaan restrukturisasi di sektor Ponta Leste yang dilaksanakan oleh Komisaris Politik Sera Key sebagai pelaksanaan dari keputusan Sidang Pleno Komite Sentral kedua di Soibada 1976. Francisco Hornay menolak penempatan Tomas Pinto sebagai sekretaris zona Iliomar karena menurutnya posisi itu harus diduduki orang dari kalangan *liurai*. Berikut pemaparan Lere Anan Timor, yang saat itu menjadi wakil sekretaris zona Iliomar:

...mereka tidak mau Tomas Pinto jadi sekretaris zona, karena mereka mau yang jadi adalah darah biru. Dia [Francisco Hornay] ingin saya yang sekretaris zona, karena saya yang darah biru. Kami menentang karena perang ini [dilancarkan] karena kita menentang eksploitasi...

Kami berdua Tomas Pinto (Lesamau) membuat laporan kepada Komite Regional dan Sera Key, komisaris politik Ponta Leste. Dengan laporan itu mereka membuat analisis menggolongkan tindakan Hornay sebagai "reaksi" dan bagian dari reaksi tingkat nasional yang dilakukan Xavier. Mereka bikin pertemuan, semua orang tidak boleh bersenjata. Dia tetap bertahan pada pendapatnya, bilang Tomas tidak boleh sekretaris. Dalam debat [mereka] menyalahkan Hornay. Kemudian [mereka] ambil keputusan melucuti senjata...Komisaris politik yang mengontrol satu peleton memerintahkan pasukan untuk melucuti senjata.

Reaksi itu hampir satu kompi. Dilucuti. Tangkap sekitar enam atau lima orang bawa ke Belta Tres tempat Komisariat, ditahan sekitar satu bulan. Komisaris politik melihat mereka telah berubah, kemudian mereka dibebaskan. Setelah dibebaskan sikap mereka ternyata tidak berubah, mereka terus saja mau melanjutkan tujuan yang dulu, mau bikin reaksi. Kemudian diharuskan lapor ke zona, mereka tidak ke zona. Mereka malah langsung ke Aquiles di Quelicai [Baucau].⁸⁴

77. Menurut Lere, Aquiles Freitas memberi mereka senjata.⁸⁵ Francisco Hornay bersama dua orang lainnya kembali ditangkap di kawasan Baguia (Baucau) dan dibunuh di Iliomar (Lautém).⁸⁶

Strategi perang

78. Agaknya pertentangan paling serius dalam tubuh Fretilin adalah mengenai strategi perang yang harus dijalankan untuk menghadapi Indonesia. Sebagian pemimpin politik, yang kemudian menjadi mayoritas, berpendapat bahwa rakyat Timor-Leste harus mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak mengharapkan bantuan dari luar. Komandan militer dan pemimpin sipil yang lain tidak sependapat. Mereka beranggapan bahwa bantuan asing diperlukan karena kekuatan Indonesia jauh lebih besar. Dalam sidang pleno pertama Komite Sentral yang diselenggarakan pada April 1976 di Barique (Manatuto), terjadi debat mengenai ini. Permintaan bantuan kepada Amerika Serikat dan sekutunya ditolak karena negeri itu dianggap imperialis. Sementara permintaan bantuan kepada Uni Soviet juga ditolak dengan alasan negeri itu 'imperialis sosial'.⁸⁷ Menurut Xanana Gusmão, dalam pertemuan tersebut Francisco Xavier do Amaral mengatakan bahwa tidak penting dari mana asal bantuan, yang penting bantuan segera datang. Sikap yang sama juga diambil oleh banyak komandan militer dan mereka memperlihatkan ketidaksukaan pada orang-orang politik.⁸⁸

Pertentangan juga terjadi dalam hal pengaderan terhadap kader-kader menengah Fretilin, dan dalam hal ini para pemimpin Fretilin cenderung untuk memilih para pemuda:

*Pemuda dijadikan kader menengah. Banyak pemuda yang dilibatkan karena menurut pandangan Fretilin pemuda lebih mudah dididik jika dibandingkan orang yang sudah tua, yang telah terbiasa dengan tradisi kolonialis. Pemuda ini menjadi penghubung antara rakyat dengan Komite Sentral Fretilin.*⁸⁹

79. Pertentangan selanjutnya berhubungan dengan peran penduduk sipil. Penduduk sipil sangat penting kedudukannya dalam strategi 'Perang Rakyat Jangka Panjang' yang diputuskan dalam Konferensi Soibada di Mei – Juni 1976. Dalam sidang ini muncul kembali ketidaksepakatan antara sejumlah pemimpin sipil dan komandan militer, yang didukung oleh Francisco Xavier do Amaral. Bagi Francisco Xavier do Amaral, keberadaan penduduk sipil membuat Falintil sulit berperang, karena tentara terbebani tugas mengamankan mereka. Karena itu, ia berpendapat lebih baik jika penduduk sipil, terutama orang yang sudah tua dan anak-anak, menyerah kepada musuh, sedang orang-orang yang badannya kuat tetap tinggal di hutan untuk berperang bersama Falintil.⁹⁰ Gagasan ini mendapat dukungan dari para komandan militer.⁹¹

80. Perbedaan pendapat tersebut diperuncing oleh ketegangan antara komandan militer dengan pemimpin sipil akibat berkurangnya wewenang para komandan militer, yang telah terjadi sebelum mengungsi ke hutan. Ketegangan ini ditambah oleh ketidaksukaan sebagian mantan sersan tentara Portugis terhadap komandan-komandan militer yang sebelumnya adalah pengurus politik. Lucas da Costa (Rama Metan) mengatakan kepada Komisi:

[Tentara Falintil yang sebelumnya berdinan dalam angkatan bersenjata Portugis] merasa gelisah berhubungan dengan beberapa anggota CCF yang masih muda usianya atau masih minim pengalaman...Ada beberapa orang [anggota CCF] terutama yang muda-muda, hanya karena keberanian berhasil merampas senjata, kemudian mengangkat diri menjadi komandan. Misalnya Meno Paixão, waktu itu dia karena berhasil merampas pistol kemudian mengangkat diri menjadi komandan.⁹²

81. Para mantan sersan yang memandang perang secara murni militer, menganggap bahwa strategi 'Perang Rakyat Jangka Panjang' tidak cocok untuk Timor-Leste.' Mereka beranggapan bahwa harus ada bantuan dari luar negeri dan bahwa penduduk sipil harus menyerah supaya tidak menjadi beban bagi Falintil. Menurut mereka, amunisi Falintil terbatas karena tidak ada bantuan dari luar dan akan cepat habis jika harus memberi perlindungan kepada penduduk sipil. Karena perang akan berlangsung lama, lebih baik amunisi digunakan sepenuhnya untuk menyerang musuh, bukan untuk melindungi penduduk sipil.⁹³

82. Bagi para pendukung strategi 'Perang Rakyat Jangka Panjang', gagasan agar penduduk sipil menyerah dianggap sebagai pengkhianatan. Mereka menganggap bahwa hanya bersama rakyat mereka bisa memenangi perang. Secara strategis, rakyat dianggap sebagai sumber kekuatan, sedangkan secara ideologis perang yang dilancarkan dipandang sebagai suatu perang revolusioner. Agaknya Komite Sentral Fretilin juga mengkhawatirkan dukungan rakyat pada kemerdekaan.[†] Lucas da Costa mengatakan kepada Komisi:

Terutama kawan-kawan yang datang dari Portugal bermaksud mempertahankan rakyat di hutan untuk mendidik rakyat itu menjadi revolusioner. Karena menurut mereka sekiranya rakyat itu disuruh menyerah maka yang belum dibekali dengan pengetahuan yang secukupnya tentang revolusi akan kembali mengklaim status sosial sebelumnya dan status sosial itu tumbuh kembali, maka revolusi proletariat tidak bisa berhasil...⁹⁴

83. Bagi yang memandang perang secara militer, masalahnya adalah bagaimana mengusir Indonesia dari Timor-Leste. Sementara bagi yang memandang perang sekaligus sebagai revolusi, perang adalah sekaligus revolusi untuk menghapuskan

.....
* Xanana Gusmão mengingat bahwa seorang mantan sersan yang pernah bertugas di negeri Afrika jajahan Portugis menentang strategi Perang Rakyat Jangka Panjang dengan mengatakan bahwa di Afrika strategi tersebut bisa dijalankan karena pasukan gerilya memiliki pangkalan di luar perbatasan negeri dan di pangkalan itu dilakukan latihan dan mendapatkan bantuan dari luar negeri. Hal yang sama tidak ada di Timor-Leste. [Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, 7 Juli 2004.]

† Francisco Xavier do Amaral juga menyebutkan alasan yang lain, yang menurutnya ada benarnya, yaitu kalau rakyat menyerah maka dunia akan menganggap yang mau merdeka hanya Fretilin saja, dan mereka tanpa dukungan rakyat. [Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral [bagian III], Dili, 18 Juni 2004.]

kelas-kelas dalam masyarakat dan karena itu harus dilancarkan bersama rakyat. Karena itu, menyuruh penduduk sipil menyerah sama dengan mengkhianati perjuangan pembebasan nasional.

84. Banyak komandan yang menganjurkan atau membiarkan rakyat menyerah, ditangkap, dan sebagian bahkan dibunuh. Contohnya meliputi penangkapan Sebastião Sarmiento dan penggantinya dari kedudukan komandan sektor Fronteira Norte,⁹⁵ penangkapan Francisco Xavier do Amaral dan pemecatannya dari jabatan Ketua Fretilin dan Presiden Republik Demokratik Timor-Leste,⁹⁶ pembunuhan Agostinho Espirito Santo (Komandan Sektor Fronteira Sul),* dan pembunuhan Martinho Soares (seorang komandan di Fronteira Norte).⁹⁷

85. Konflik mengenai penduduk sipil ini tidak semata-mata berlatarbelakang ideologis, tetapi juga berhubungan dengan perkembangan perang. Dengan meningkatnya serangan militer yang dilancarkan Indonesia, semakin banyak tempat dalam *zonas libertadas* yang tidak lagi bisa dipertahankan. Di sana-sini ada upaya dari komandan-komandan militer dan pemimpin sipil untuk berunding dengan musuh tentang penyerahan.⁹⁸ Adriano Soares Lemos menyampaikan kepada Komisi:

Pemimpin Fretilin Ali Alkatiri, Meno Paixão, Pedro Gonçalves dari Sektor Fronteira Norte mulai membuat kesepakatan bersama untuk membawa para penduduk turun menyerah ke ABRI, karena keadaan penduduk pada waktu itu sudah pada masa kritis...jika masih bertahan lagi di hutan, semuanya akan meninggal karena kelaparan ataupun penyakit. Melalui kesepakatan tersebut mereka semua menyetujuinya, maka mulailah Ali Alkatiri dan Filomeno Paixão mengadakan kontak dengan ABRI di Fatubessi [Ermera], memberitahukan penyerahan diri penduduk. ABRI menerimanya, maka pada 6 Februari 1979, kami mulai turun dari Fatubessi ke daerah Caisoru [Liquiçá]. Kemudian menyerah ke ABRI Batalion 512 pada 7 Februari 1979.⁹⁹

86. Tindakan-tindakan seperti itu memperuncing konflik di kalangan pemimpin politik dan komandan militer. Ketika Komandan Sektor Fronteira Norte, Filomeno Paixão, bersama sejumlah pemimpin politik dan banyak penduduk sipil menyerah, Komisaris Politik Fronteira Norte Maukruma menentang tindakan mereka. Ia melanjutkan Resistansi hingga terbunuh bersama istrinya pada Maret 1979.

87. Pertentangan-pertentangan tersebut tidak terselesaikan dalam tubuh Resistansi. Pertentangan-pertentangan berhenti semata-mata karena ofensif baru militer Indonesia pada 1978-1979 yang berakibat pada hancurnya *zonas libertadas*.

* Menurut Maria de Fátima Vaz de Jesus, Comandante Agostinho Espirito Santo bertentangan dengan Komisaris Politik César Maulaka mengenai strategi perang. [Wawancara CAVR dengan Maria de Fatima Vaz de Jesus, 23 September 2004 dan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.]

Akhir *base de apoio*

88. Masa *base de apoio* berakhir dengan serangan besar Indonesia pada 1978 – 1979. Serangan yang oleh Fretilin disebut ‘pengepungan dan pemusnahan’ (*cerco e aniquilamento*) ini dimulai pada pertengahan 1978 dengan gempuran berat terhadap kawasan barat (Sektor Fronteira Sul dan Sektor Fronteira Norte). Selanjutnya serangan diarahkan ke timur dengan menggempur basis pertahanan di Pegunungan Matebian dan Lembah Natarbora (Manatuto). Menyusul kemudian adalah basis di Manatuto. Serangan kemudian kembali diarahkan ke wilayah barat pada akhir offensif, bulan-bulan awal 1979, untuk menghancurkan kekuatan yang tersisa di wilayah itu. Offensif ini tidak hanya melibatkan kekuatan darat, tetapi juga penembakan dan pengeboman dari udara oleh pesawat-pesawat angkatan udara dan penembakan meriam dari kapal-kapal angkatan laut. (Lihat Bagian 3: Sejarah konflik, segmen 3.11 – intensifikasi militer).

89. Serangan-serangan baru ini tidak bisa ditahan oleh Falintil yang menghadapinya dengan pertahanan statis-posisional.[†] Berbeda dengan salah satu keunggulan Cina ketika perang menghadapi Jepang, Fretilin tidak bisa mundur ke pangkalan pengunduran yang jauh dan tidak terjangkau oleh tentara penyerbu Indonesia, yang merupakan salah satu prinsip dasar strategi ‘Perang Rakyat Jangka Panjang.’ Basis-basis yang dibangun Falintil, seperti di sekitar Gunung Matebian, Gunung Kablaki, dan Cailaco (Bobonaro) bisa dijangkau oleh tentara Indonesia, baik dari darat, udara, maupun laut. Seorang kader Fretilin menggambarkan kehancuran pertahanan di Manatuto kepada Komisi:

Pada bulan Mei 1978, situasi semakin sulit, musuh mulai mengepung dari perbatasan. Kemudian pada bulan Juli 1978 tentara mulai melakukan pengepungan dan pemusnahan dari sektor utara bagian tengah, karena kekuatan dari Manatuto juga mulai merangsek maju, kemudian datang dari Aileu, datang dari Laklubar, terpaksa kami harus keluar dari Hatuconan [Laclo, Manatuto] menuju Remexio [Aileu]. Kemudian kami berjalan memutar dari Aileu dan kembali ke Hatuconan. Di sana banyak juga yang meninggal, karena kakinya luka, tidak mampu berjalan, bayi yang baru lahir, kelaparan.

* Agaknya penyebutan ini mengikuti istilah ‘encirclement and suppression’ yang digunakan Mao Tse Tung dalam “Problems on War and Strategy” (ditulis pada 1938), dimuat dalam *Selected Works of Mao Tse-tung*, Vol. 2 (Peking: Foreign Languages Press, 1967). Istilah tersebut muncul pada halaman 222 kumpulan tulisan itu.

† Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, hal. 18. Satu dokumen Fretilin, “Relatório da Delegação do Comité Central da Fretilin em Missão de Serviço no Exterior do País”, menyebutkan bahwa serangan ‘pengepungan dan pemusnahan’ yang dilancarkan terhadap basis Fatubessi (Ermera) 1 Januari 1978 berhasil ditahan oleh Falintil, tetapi pertempuran terus meningkat di Fatululik (Covalima), Dili, Remexio (Aileu), Baucau, Baguia (Baucau), dan Bazar-tete (Liquiçá). Selanjutnya pertempuran terjadi di Fatululik, Fatubessi, Fatumean (Covalima), Suai (Covalima), dan Atsabe (Ermera) pada minggu kedua Maret 1978 dan banyak tentara Falintil yang mati. Selanjutnya ‘pengepungan dan pemusnahan’ dilancarkan terhadap Sektor Centro Norte, Centro Sul, dan Centro Leste dan pada akhir Juni, Remexio (yang letaknya 15 km dari Dili) jatuh ke tangan tentara Indonesia. [Relatório da Delegação do Comité Central da Fretilin em Missão de Serviço no Exterior do País, hal. 5.]

Mereka yang meninggal kami bungkus saja dengan tikar kemudian tinggalkan saja, karena tidak ada waktu untuk menguburnya, sementara musuh terus mengejar.

Pada malam hari kami bergerak dengan berjalan kaki, pagi hari kami harus sembunyi karena pesawat tempur OV-10 terus mengikuti dan menembaki kami...`serta mengebom hingga banyak kawan, keluarga, dan rakyat yang meninggal. Selain itu ada juga yang meninggal terkena ranjau darat.

Pada waktu pesawat OV-10 menembak, rakyat bukan berada di semak belukar atau hutan, akan tetapi ribuan rakyat berada di tengah lapangan terbuka, sehingga banyak yang meninggal...

Di dalam pengepungan dan pemusnahan pada bulan Juli 1978, semua rakyat tidak ada yang menyerah. Kemudian kami bersembunyi di Ilimanu [Laclo, Manatuto]. Pagi harinya militer Indonesia kembali mengebom kami di Ilimanu hingga kami tidak dapat melarikan diri.¹⁰⁰

90. Maria José da Costa, yang saat itu berada di basis Sektor Centro Sul di Alas (Manufahi), memberikan gambaran yang serupa:

Pada 1978, musuh mulai melakukan pengepungan secara strategis di Dolok, banyak yang meninggal karena kelaparan. Semua makanan yang dimiliki penduduk dibakar dan sebagian ditinggalkan begitu saja oleh keluarga. Pengepungan tersebut mereka lakukan sebagai berikut: kapal perang menembak dari laut, pesawat tempur menyerang dari udara, membakar alang-alang yang kering, kemudian pasukan menyerang dari darat.

Pada saat itu musim kemarau [Agustus], tentara membakar alang-alang sehingga api dengan cepat membakar wilayah tersebut bagai disiram bensin. Kami yang berada dalam kepungan tidak sempat keluar karena api begitu besar. Karena situasi begitu terjepit, banyak orang yang tidak dapat menyelamatkan diri. Strategi [tentara Indonesia] ini mengakibatkan banyak orang yang tidak dapat keluar.

Masyarakat dapat keluar dari kepungan ketika pada tengah malam saat tentara Indonesia kembali beristirahat dalam kamp mereka. Sewaktu kami keluar kami tetap dihujani peluru dari kapal perang yang berada di laut. Aku menyaksikan banyak orang yang mati terbakar...

.....
* Ada kesaksian-kesaksian mengenai penggunaan jet tempur OV-10 Bronco dalam serangan udara. Komisi juga menerima laporan mengenai penggunaan pesawat pengebom Skyhawk. [Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 21 September 2004; Jacinto das Neves Raimundo Alves, Dili, 5 Agustus 2004.] Tetapi harus dicatat bahwa pemerintah Inggris membantah bahwa pesawat terbang Skyhawk digunakan untuk keperluan tempur di Timor-Leste pada masa itu. [Lihat submisi tertulis Pat Walsh kepada CAVR, berdasarkan pada kesaksiannya sebagai saksi ahli pada Audiensi Publik CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.]

Setelah berhasil keluar dari kepungan, musuh terus melakukan kepungan setengah lingkaran. Dengan dukungan dari laut, mereka menggiring kami ke sebuah dataran, hal ini menyebabkan kami lari tunggang-langgang tidak tentu arah dan musuh mulai menangkap kami.¹⁰¹

91. Basis wilayah timur di pegunungan Matebian jatuh pada 22 November 1978.¹⁰² Pasukan Falintil dibagi dalam kelompok-kelompok, sebagian menuju ke Centro Leste untuk bergabung dengan pasukan nasional, sebagian menuju timur untuk melancarkan gerilya. Xanana Gusmão, yang waktu itu adalah seorang *adjunto* di Sektor Ponta Leste, mengemukakan kepada Komisi:

...tanggal 22 November kami berpencar di Matebian. Walaupun waktu itu dalam kepungan, kami selalu berusaha berhubungan dengan Komite Sentral di Centro [Leste]. Kami beritahukan bahwa kami tidak mampu lagi bertahan dan mereka menyuruh penduduk menyerah dan menempatkan satu kompi gerilya di sektor Ponta Leste...

Kami kontak dengan menggunakan Racal [radio komunikasi], karena itu kami tahu keadaan di seluruh negeri. Kami pikir sektor-sektor lain telah hancur tidak terkendali. Sebagian penduduk menyerah, sebagian ditangkap.¹⁰³

92. Basis yang terakhir dihancurkan adalah di Fatubessi (Ermera), yang jatuh pada Februari 1979. Adriano João, seorang kader menengah di Fronteira Sul mengatakan kepada Komisi:

Base de apoio [di Fatubessi] hancur pada tanggal 16 Februari 1979. Rakyat secara besar-besaran menyerah karena dikepung oleh militer Indonesia dengan menggunakan pesawat tempur dan menghancurkan basis pertahanan sekitar pegunungan Cailaco [Bobonaro]. Akibat dari kampanye militer Indonesia itu hampir seluruh masyarakat turun ke kota atas perintah dari Adjunto Rui Fernandes dan Comandante Sector Fronteira Norte Meno Paixão yang menulis surat kepada kami waktu itu.¹⁰⁴

93. Seperti disebutkan Xanana Gusmão, sebelum basis-basis pertahanan *zonas liberdades* hancur, Komite Sentral Fretilin telah memutuskan agar penduduk sipil menyerah dan pasukan Falintil melanjutkan perang resistansi. Keputusan ini disebarkan ke semua sektor. Jacinto Alves mengingat:

Cerco e aniquilamento terjadi, Komite Sentral menyadari lebih baik rakyat pergi menyerah...Dan waktu itu diumumkan kepada rakyat, orang tua yang berumur di atas 56 dan mereka yang berumur di bawah 18 tahun itu bisa menyerah bersama perempuan dan biarkan laki-laki yang masih kuat untuk bertahan di atas [hutan].¹⁰⁵

94. Keputusan menyerah yang sebelum ofensif besar tentara Indonesia dikutuk sebagai pengkhianatan, terpaksa diambil oleh Komite Sentral Fretilin.* Dengan keputusan ini tidak berarti bahwa perjuangan selanjutnya hanya dilancarkan oleh tentara Falintil. Komite Sentral Fretilin memberikan pesan kepada penduduk agar terus membantu Falintil dan tetap berjuang untuk kemerdekaan Timor-Leste, walaupun tanpa menyebutkan secara khusus bagaimana perjuangan selanjutnya.¹⁰⁶ Benvinda G.D. Lopes, seorang pengurus OPMT di wilayah Uatulari mengemukakan pengalamannya:

Pada tanggal 23 Desember 1978, datang surat dari Baucau memberi tahu kepada Komandan Calisai dan Moiseskin menyatakan, "Sekarang penduduk harus turun untuk menyerah, karena perang ini masih panjang." Tanggal 23 itu juga kakak saya Moiseskin datang memberi penjelasan kepada kami, "Sekarang kalian boleh keluar, tidak perlu tinggal di sini terus, kalau tidak akan mati, karena makanan dan obat-obatan tidak ada lagi. Sekarang kami sampaikan kepada kalian semua, boleh menyerah kepada Indonesia, tetapi kalian tidak boleh lupa satu hal. Tangan kalian boleh bekerja pada Indonesia, tetapi kalian harus terus memikirkan kami. Kalian boleh ke sana tetapi kalian harus mencari jalan untuk mencari kami, melanjutkan hubungan dengan kami, kalian tidak boleh takut." Malam itu juga tanggal 23 Desember 1978 kami mulai turun dari Kilobuti [Uatulari, Viqueque] ke arah Matebian, kemudian menyerah kepada tentara Indonesia.¹⁰⁷

95. Fretilin banyak menderita kerugian dalam serangan militer Indonesia ini. Francisco Xavier do Amaral, mantan Ketua Fretilin dan Presiden Republik Demokratik Timor-Leste, ditangkap oleh tentara Indonesia di wilayah Lembah Sungai Dilor (Lacluta, Viqueque) pada Agustus 1978.¹⁰⁸ Selanjutnya Alarico Fernandes, Menteri Penerangan dan Keamanan Dalam Negeri dalam pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste, menyerah bersama sejumlah anggota Komite Sentral yang lain.† Kehilangan yang mungkin terbesar adalah kematian

.....
* Taur Matan Ruak membandingkan tindakan pada dua keadaan yang berbeda itu: "Awalnya pada 1977...1976 orang menyerah secara sukarela itu merupakan persoalan besar...itu persoalan besar! Sekarang...1979 penyerahan ini, kita turun bukan secara sukarela. Tidak sukarela karena terpaksa, itu yang mengharuskan orang pergi saja dan karena itu pimpinan menerima ini. Mereka terdesak untuk menerima..." [Wawancara dengan CAVR (bagian II), Dili, 14 Juni 2004.]

† Masih belum jelas sebab Alarico Fernandes menyerah kepada tentara Indonesia. Sumber resmi Fretilin menyebut sebagai "pengkhianatan" yang disebabkan oleh sikapnya yang tidak percaya pada kekuatan sendiri dan terus mengharapkan bantuan asing, bahwa Alarico Fernandes berusaha mencari jalan kompromi dengan Indonesia dan untuk itu memisahkan diri dari Komite Sentral Fretilin dan mengkhianati mereka. [Relatório da Delegação do Comité Central da Fretilin em Missão de Serviço no Exterior do País, hal. 6.] Ia disebut-sebut terlibat dalam apa yang disebut operasi "Skylight" dari militer Indonesia yang bertujuan menangkap para pemimpin tertinggi Fretilin. [Wawancara CAVR dengan Kay Rala Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004; "Six Years of Heroic Armed Resistance," East Timor News, Winter 1982, hal. 10-12]. Mari Alkatiri menyebutkan kemungkinan Alarico Fernandes kecewa karena setelah pemecatan Francisco Xavier do Amaral dari kedudukan Ketua Fretilin dan Presiden RDTL (yang dalam hal ini Alarico Fernandes berperan penting), yang diangkat menggantikan kedudukan Nicolau Lobato sebagai Wakil Ketua Fretilin dan Perdana Menteri RDTL adalah Mau Lear dan bukan dirinya. [Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2003.] Mari Alkatiri juga menyatakan bahwa Alarico Fernandes

Ketua Fretilin dan Presiden RDTL Nicolau Lobato pada suatu pertempuran, 31 Desember 1978.¹⁰⁹ Pemimpin penting lain, Mau Lear (Wakil Ketua Fretilin dan Perdana Menteri RDTL) dan Sa'he (Komisaris Politik Nasional) mati terbunuh pada Februari 1979.¹¹⁰ Maukruma, Komisaris Politik Fronteira Norte, terbunuh dalam pertempuran sekitar Maret 1979.¹¹¹ Setelah serangan berakhir, hanya tiga anggota Komite Sentral yang melanjutkan perjuangan di hutan setelah Maret 1979: yang lainnya mati dalam pertempuran, tertangkap, atau menyerah kepada tentara Indonesia. Banyak dari yang ditangkap atau menyerah kepada tentara Indonesia kemudian dieksekusi atau hilang.

96. Dengan jatuhnya *bases de apoio* pada 1978 – 1979, berakhir pula riwayat *zonas libertadas* dan strategi 'Perang Rakyat Jangka Panjang'. Perang posisi mempertahankan wilayah tertentu dengan penduduk di dalamnya telah berakhir.[†] Begitu pula upaya menciptakan masyarakat baru yang bebas dari penindasan dan pengisapan, terabaikan. Penduduk menyerah kepada tentara Indonesia dan selanjutnya menjalani hidup di bawah kekuasaan pemerintah pendudukan. Sejumlah pemimpin sipil Fretilin, prajurit, dan komandan Falintil yang berhasil meloloskan diri kemudian membentuk satuan-satuan kecil melanjutkan perjuangan dengan melancarkan perang gerilya.

Restrukturisasi Resistansi 1981 – 1987

97. Dua tahun pertama setelah hancurnya *zonas libertadas* ('wilayah bebas') pemimpin Fretilin yang tersisa di Sektor Ponta Leste berusaha mencari anggota-anggota Komite Sentral Fretilin dan pasukan-pasukan Falintil di tempat-tempat lain. Mereka berusaha membangun dengan mantan kader-kader Fretilin dan komandan-komandan Falintil yang telah menyerah atau tertangkap yang tinggal di wilayah yang dikuasai tentara Indonesia. Mereka memilih yang bisa mereka percaya

"tidak punya ideologi": ia menangkap Francisco Xavier do Amaral dengan harapan dipilih menjadi Wakil Ketua Fretilin dan Perdana Menteri RDTL, dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, ia menuduh Nicolau Lobato sebagai "topi untuk menyembunyikan orang-orang komunis" dan melancarkan propaganda antikomunis. [Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004]. Sedangkan Xanana Gusmão menyebut Alarico Fernandes sebagai orang yang "joga sala, joga ba joga mai" (salah bermain, bermain ke sana-kemari): tiba-tiba menyatakan diri sebagai Marxis-Leninis pada Konferensi Soibada 1976, menangkap dan meniksa Francisco Xavier do Amaral pada 1977, kemudian menyerah dan muncul dengan operasi "Skylight." Xanana Gusmão menyebut "Skylight" sebagai "gerakan Alarico" dan bahwa pemimpin-pemimpin Resistansi di wilayah Matebian mendengar gerakan ini setelah Alarico menyerah pada September saat Indonesia sedang mempersiapkan serangan gencar akhir 1978 [Wawancara CAVR dengan Kay Rala Xanana Gusmão, Dili 7 Juli 2004. Lihat pula Bagian 3: Sejarah konflik.]

* Tiga orang anggota Komite Sentral Fretilin itu adalah: Xanana Gusmão, Fernando Txay, dan António Manuel Gomes da Costa (Mau Hunu).

†Menurut Ernest Chamberlain, pada saat basis di Matebian jatuh, Falintil sedang mengubah strategi pertahanannya dari 'basis-posisional' ke 'bergerak' yang untuk itu pasukan dirombak dengan membentuk pasukan bergerak berkekuatan 11.000 orang yang didukung oleh kelompok-kelompok gerilya (Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, hal. 19). Masih belum jelas mengapa strategi ini baru dilaksanakan pada akhir 1978, padahal keputusan untuk melancarkan 'Perang Rakyat Jangka Panjang' sudah diambil pada Mei 1976, yang berarti bahwa perang posisi akan dilancarkan disertai dengan perang bergerak dan perang gerilya.

untuk terus melanjutkan perjuangan dalam bentuk baru. Mereka juga berusaha mengumpulkan informasi mengenai keadaan di wilayah pendudukan dan strategi serta penempatan satuan-satuan tentara Indonesia. Kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dibatasi oleh gangguan terus-menerus oleh tentara Indonesia, yang memuncak dengan dilancarkannya operasi keamanan mulai pertengahan 1981 dan memaksa mereka terus-menerus menghindar dari pertempuran langsung (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

98. Setelah kehancuran *base de apoio* di *zonas libertadas* pasukan Falintil dibagi ke dalam satuan-satuan kecil terdiri atas tiga sampai empat orang. Satuan ini lebih kecil daripada satuan terkecil yang berlaku sebelumnya, yaitu *secção* (regu) yang berkekuatan tujuh orang. Ketika memasuki desa di wilayah pendudukan untuk membangun hubungan dengan penduduk sipil, satuan Falintil menyembunyikan senjata dan pakaian seragam. Kadang-kadang Falintil bisa membentuk satuan yang lebih besar untuk keperluan tertentu. Xanana Gusmão mengatakan bahwa pada Mei 1980 ia membawa satu kompi (berkekuatan sekitar 60 orang) pergi ke arah barat sampai Gunung Kablaki untuk mencari pasukan Resistansi yang masih bertahan di gunung-gunung.^{*} Komandan militer Kilik Wae Gae berusaha membangun satu pangkalan tetap yang mengonsentrasikan satu batalion pasukan.[†] Seorang informan mengatakan kepada Komisi bahwa pada awal 1979 Xanana Gusmão dan Kilik Wae Gae berhasil membentuk satu “brigade” yang terdiri atas empat kompi.[‡]

Reorganisasi Resistansi untuk menghadapi keadaan baru

99. Pada pertemuan para kader politik dan komandan militer yang tersisa pada Maret 1981 struktur organisasi baru untuk resistansi mulai muncul. ‘Konferensi Reorganisasi Nasional’ yang pertama setelah hancurnya *zonas libertadas* ini diselenggarakan di kawasan Maubai di Gunung Aitana di Subdistrik Lacluta (Viqueque) mulai 1 sampai dengan 8 Maret 1981. Konferensi ini diselenggarakan oleh dua anggota Komite Sentral Fretilin yang masih aktif berjuang di hutan, Kay Rala Xanana Gusmão dan Mau Hunu Bulerek Karantaianu. Butir pertama dalam agenda adalah pengangkatan para anggota baru Komite Sentral, yaitu José da Costa (Mau Hudu Ran Kadalak), Bere Malae Laka, Reinaldo Correia (Kilik Wae Gae), Dinis Carvalho (Nelo Kadomi Timor), Sakin Nere Ulas Timor Lemo Rai, Holy Natxa, Tito da Costa (Lere Anan Timor), Hari Nere, dan Paulino Gama (Mauk Moruk Teki Timor Ran Nakali Lemo Rai).¹¹² Mereka bersama dua anggota lama

* Xanana Gusmão mengatakan bahwa ia melakukan pencarian anggota-anggota Komite Sentral Fretilin sampai ke Dili dengan satu kompi pasukan. [Xanana Gusmão, *To Resist is To Win!*, ed. Niner, hal 64.]

† Lere Anan Timor, yang waktu itu adalah seorang kader menengah di Ponta Leste, mengatakan bahwa Kilik Wae Gae, yang sebelum jatuhnya *zonas libertadas* adalah seorang komandan sektor, memimpin upaya ini. [Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan *Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No. 18.]

‡ Seorang narasumber mengatakan bahwa “setelah Nicolau Lobato ditembak mati” Xanana Gusmão dan Kilik Wae Gae membentuk “brigade” yang terdiri atas empat kompi, yaitu kompi Lospalos, Laga (dan Quelicai), Sul, dan Ponta Leste bagian barat. [Wawancara CAVR dengan Sebastião da Silva, Viqueque, Juni 2003.]

Komite Sentral, Xanana Gusmão dan Mau Hunu Bolerek Karantianu memimpin perjuangan di dalam negeri. Sementara anggota Komite Sentral lama yang berada di luar negeri tetap pada keanggotaan mereka, yaitu Abílio Abrantes Araújo, Mari Alkatiri, Roque Rodrigues, José Luís Guterres, Guilhermina Araújo, José Ramos-Horta, dan Rogério Lobato. Abílio Araújo juga ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal, sementara Xanana Gusmão menjadi Komisaris Politik Nasional (*Comissário Política Nacional*).¹¹³ Merekalah yang selanjutnya secara resmi memimpin Resistansi.

100. Dalam konferensi tersebut, para anggota Komite Sentral di dalam negeri memutuskan membentuk Partai Marxis-Leninis Fretilin (Partido Marxista-Leninista Fretilin, PMLF) dan Dewan Revolusioner Resistansi Nasional (Concelho Revolucionário da Resistência Nacional, CRRN), serta membentuk struktur baru untuk Falintil.¹¹⁴ Masih belum jelas apa sebab sesungguhnya perubahan dari Fretilin menjadi PMLF. Xanana Gusmão mengatakan bahwa yang mereka lakukan hanyalah “mengikuti” keputusan yang telah diambil oleh “para pendahulu” pada Konferensi Laline 1977, ketika mengikuti pengarahannya dari Departemen Orientasi Politik dan Ideologi (Departamento de Orientação Política e Ideológica, DOPI), Marxisme-Leninisme secara resmi dinyatakan sebagai ideologi Fretilin.¹¹⁵ Komisi tidak berhasil mendapatkan informasi mengenai struktur partai di bawah Komite Sentral. Kemungkinan PMLF hanya terdiri atas Komite Sentral, tanpa organ-organ yang beroperasi pada tingkatan di bawahnya.

101. CRRN dimaksudkan sebagai wadah organisasional untuk semua orang yang mau bergabung dalam perjuangan untuk mengakhiri penguasaan Indonesia terhadap Timor-Leste. Dengan demikian CRRN adalah undangan dari PMLF kepada semua orang Timor-Leste tanpa melihat latar belakang partai atau latar belakang lainnya untuk ambil bagian dalam Resistansi terhadap pendudukan Indonesia. Belum diperoleh informasi yang jelas mengenai struktur CRRN.[†] Satu sumber menyebutkan bahwa pemimpin CRRN pada tingkat nasional terdiri atas para kader politik Fretilin, komandan militer Falintil, dan “wakil-wakil penduduk di wilayah yang dikuasai Indonesia.”¹¹⁶ Komisi Regional Resistansi (Comissões Regionais de Resistência) beroperasi sebagai organ CRRN pada tingkat distrik yang membawahi Pusat Resistansi Nasional (Centros da Resistência Nacional, Cernac) dan Inti Resistansi Rakyat

* Beberapa kesaksian menyebutkan bahwa alasan perubahan tersebut bersifat taktis, yaitu agar mendapatkan bantuan dari blok negara-negara sosialis. José da Conceição mengatakan kepada Komisi bahwa setelah kembali dari menghadiri Konferensi Reorganisasi Nasional, anggota Komite Sentral Fretilin Mau Hunu menjelaskan kepadanya bahwa perubahan tersebut diperlukan agar mendapatkan dukungan politik dan diplomatik dari blok negara-negara sosialis dalam perjuangan untuk pembebasan nasional. [Wawancara CAVR dengan José da Conceição, Dili, 20 Oktober 2004.] Justo Talenta memberikan keterangan yang mirip. [Wawancara CAVR dengan Justo Talenta, Dili, 3 November 2002.]

† António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak) menyebutkan bahwa CRRN beranggotakan: Xanana Gusmão, Mau Hudu Ran Kadalak (José da Costa), Mau Hunu Bulerek Karantianu, Bere Malae Laka, Kilik Wae Gae, Nelo Kadomi Timur (Dinis Carvalho), Mau Moruk Teki Timor Ran Nakali Lemo Rai, Ologari Asuwain, Lere Anan Timor, Konis Santana, Venancio Ferraz, Merak, Okan, dan Taur Matan Ruak. [Wawancara CAVR dengan António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 18 Desember 2003.] Enam orang dari mereka bukan anggota Komite Sentral PMLF, yaitu Venancio Ferraz, Ologari Asuwain, Konis Santana, Merak, Okan, dan Taur Matan Ruak, tetapi mereka adalah kader menengah (*quadros médios*) Fretilin atau komandan Falintil.

(Núcleos da Resistência Popular, NUREP) pada tingkat desa.¹¹⁷ Namun, struktur-struktur ini tidak beroperasi merata di semua tempat di Timor-Leste. Seorang aktivis bawahanah mengemukakan kesaksiannya kepada Komisi:

Struktur CRRN waktu itu hanya berlaku di tingkat atas atau di hutan, sedangkan di kota atau basis belum ada. Itu hanya semacam taktik menandakan bahwa di hutan masih ada resistansi front bersenjata yang masih mau melanjutkan perjuangan. Struktur hanya ada di komando Falintil saja. Penanggungjawab tertinggi adalah Xanana Gusmão. Yang mengetahui struktur hanyalah para anggota Falintil. Kami sendiri tidak tahu persis tentang struktur tersebut.¹¹⁸

102. Markas besar CRRN berkedudukan di hutan. Organ-organ pada tingkat distrik hingga subdistrik juga beroperasi dari hutan. Yang lainnya beroperasi secara rahasia di wilayah yang dikuasai Indonesia baik di kota, di desa-desa, maupun di tempat-tempat permukiman baru.

103. Pemimpin tertinggi militer Falintil sekarang adalah panglima (*comandante-em-chefe*) dan kepala staf umum (*chefe do estado maior*), yang dijabat oleh Xanana Gusmão dan Reinaldo Correia (Kilik Wae Gae). Mereka membawahi kompi-kompi Falintil yang seluruhnya ada empat kompi yang ditempatkan di wilayah operasi gerilya masing-masing. Berbeda dengan di masa *zonas libertadas*, kompi-kompi ini tidak berpangkalan tetap tetapi merupakan satuan-satuan gerilya yang terus bergerak untuk melakukan serangan gerilya. Setelah 'Konferensi Reorganisasi Nasional', disebut-sebut adanya Brigade Merah (Brigada Vermelha), yang dipimpin oleh Mauk Moruk sebagai Komandan Pertama (*Primeiro Comandante*) dan Ologari Assuwain sebagai Komandan Kedua (*Segundo Comandante*). Tidak begitu jelas apakah Brigade Vermelha adalah salah satu unit pasukan di dalam Falintil ataukah pada waktu itu semua pasukan Falintil direorganisasikan ke dalam Brigade Vermelha.*

104. Pemimpin CRRN adalah orang-orang yang sebelum hancurnya *zonas libertadas* adalah para kader tinggi (*quadros superiores*) dan kader menengah (*quadros médios*) serta komandan-komandan Falintil, yang merupakan indikasi bahwa CRRN didominasi oleh Fretilin.†

* Agaknya Brigade Vermelha berfungsi sama dengan Brigade de Choque sebelum hancurnya *zonas libertadas*. Pasukan ini tidak berpangkalan di satu tempat tertentu tetapi bergerak (*movele*) untuk melancarkan serangan kejutan terhadap tentara Indonesia. Jacinto das Neves Raimundo Alves, mantan *colaborador* (staf) pada Staf Umum Falintil (1977-1978), mengatakan bahwa Staf Umum Falintil pada 1977 menyusun rencana strategi untuk melakukan perang bergerak dengan konsentrasi pada jalur tengah dari ujung timur sampai perbatasan di barat. Resistansi mengosongkan wilayah bagian utara dan penduduk ditempatkan di bagian selatan yang tanahnya cukup subur. Jalur tengah yang memanjang dari timur sampai barat menjadi medan tempur bergerak pasukan-pasukan Brigade de Choque Falintil. Beberapa kompi Brigade de Choque dibentuk dan dilatih secara khusus di bawah pengarahannya mantan Komandan Sektor Fronteira Norte, Sebastião Sarmento. [Wawancara CAVR dengan Jacinto das Neves Raimundo Alves, Dili, 11 Mei 2004.] Ernest Chamberlain menyebutkan bahwa sebelum jatuhnya basis Matebian, ada rencana untuk membentuk pasukan untuk perang bergerak yang berkekuatan sekitar 11.000 orang. [Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, hal. 19.]

† Xanana Gusmão dan Mau Hunu adalah anggota Komite Sentral, yang berarti kader tinggi. Bere Malae Laka, Lere Anan Timor, Mau Hudu, dan Konis Santana adalah para kader yang bertanggung jawab atas

105. Pembagian wilayah secara militer berubah samasekali. Jika dulu negeri dibagi menjadi enam sektor, pada Konferensi Reorganisasi Nasional, seluruh negeri dibagi menjadi tiga ‘region’ (*regiões*):

| Region | Distrik yang menjadi wilayahnya: | Komandan |
|---|--|--------------------------------|
| Region Ujung Timur (<i>Região Ponta Leste</i> , juga dikenal dengan nama Funu Sei Nafatin) | Lospalos, Viqueque, Baucau, dan Manatuto | Kroasu dan Lemorai |
| Region Tengah (<i>Região Centro</i> , juga dikenal dengan nama Nakroman) | Dili, Aileu, Ermera, dan Liquiçá | Fera Lafaek |
| Region Perbatasan (<i>Região Fronteira</i> , juga dikenal dengan nama Haksolok) | Suai, Ainaro, dan Maliana | Venancio Ferraz ¹¹⁹ |

106. Selain itu dibentuk *zona* pada tingkat distrik yang dipimpin oleh tiga orang *adjunto* yang salah satunya menjadi ‘penanggungjawab utama’ (*responsável principal*). Para *adjunto* zona membawahi beberapa sel (*celula*), yang terdiri atas orang-orang yang disebut asisten (*assistente*) dan aktivis (*activista*).¹²⁰

107. Pembagian wilayah ini samasekali berbeda dengan masa *zonas libertadas*. Pada waktu itu, wilayah negeri dibagi ke dalam unit-unit administratif-politik dan militer. Pada setiap tingkatan dalam struktur ini, para kader politik mengurus program produksi pertanian, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Setelah hancurnya *zonas libertadas*, pembagian wilayah samasekali bersifat militer dan didasarkan pada operasi gerilya. Di dalam ketiga region tidak ada lagi penduduk sipil dalam jumlah besar dan karena itu unit administratif dan kegiatan-kegiatan pendukungnya tidak lagi ada. Kegiatan utama para kader politik—*adjunto*, *assistente*, dan *activist*—adalah membentuk sel-sel bawahan di kalangan penduduk yang tinggal di desa-desa yang dikuasai tentara Indonesia, melakukan propaganda untuk memelihara komitmen penduduk pada cita-cita kemerdekaan dan memberikan dukungan logistik dan informasi kepada gerilyawan di hutan. Dalam rangka itu, di setiap zona dibentuk suatu sistem *caixa* (secara harfiah berarti kotak) yang dioperasikan oleh seorang penanggungjawab tempat penghubung (*responsável caixa*) dan para kurir (*ligaçãõ*).*

regiões dan *zona*, yang berarti adalah kader menengah (*quadros medios*). Kilik Wae Gae dan Nelo Kadomi Timor adalah mantan komandan Falintil yang bertanggung jawab atas *região*, sementara Taur Matan Ruak adalah komandan kompi. Tidak ada informasi mengenai keanggotaan orang bukan Fretilin dalam CRRN.

* *Ligaçãõ* (‘hubungan’) kemudian digantikan dengan istilah *vias de canais* (‘saluran penghubung’) dan selanjutnya sejak 1986 lebih dikenal dengan sebutan *estafeta*. [Wawancara CAVR dengan Vasco da Gama (Criado), Dili, 18 Mei 2004.] Fungsi mereka adalah kurir yang membawa surat atau barang dari satu tempat penghubung (‘caixa’) ke tempat penghubung yang lain untuk keperluan Falintil.

108. Dengan tidak adanya penduduk, Resistansi di dalam negeri sekarang berfokus pada perjuangan bersenjata. Para kader politik memang masih berhubungan dengan penduduk, tetapi bukan untuk mengorganisasi mereka dalam kegiatan “membangun struktur-struktur baru yang melayani rakyat,” melainkan untuk membantu satuan-satuan gerilya Falintil dengan dukungan logistik dan informasi.¹²¹ Peran mereka berubah menjadi jalur penghubung antara gerilyawan di hutan dengan penduduk di desa-desa dan kota-kota yang diduduki Indonesia.

109. Mengingat pada saat itu resistansi bersenjata berbasis di hutan, maka secara operasional inti resistansi adalah Falintil, bukan Fretilin atau pun CRRN. Fretilin, sebagai ‘pelopor’ (dalam bahasa Tetum disebut *matadalan*) perjuangan, secara resmi masih merumuskan politik perjuangan, tetapi karena perjuangan yang berlangsung sekarang terutama adalah perjuangan bersenjata, politik yang nyata ada hanyalah politik perjuangan bersenjata. Di masa sebelumnya, Komite Sentral Fretilin membuat keputusan mengenai masalah-masalah kebijakan yang luas dalam rapat pleno, atau kalau Komite Sentral tidak bisa mengadakan rapat lengkap, keputusan bisa diambil melalui Komite Tetap. Keputusan mengenai strategi militer mengikuti kebijakan tersebut. Setelah hancurnya *zonas libertadas*, keputusan-keputusan yang dibuat terutama adalah mengenai perjuangan bersenjata dan dengan demikian ini berada dalam wewenang Panglima Falintil, yang kadang-kadang mengambil keputusan bersama dengan Kepala Staf. Hal ini tersirat dari pernyataan Xanana sehubungan dengan restrukturisasi 1984. Restrukturisasi ini tidak diterima oleh sejumlah komandan yang dipindahtugaskan:

Saya bilang sebagai Panglima Tertinggi, di militer tidak ada demokrasi, kita perang atau tidak perang. Saya bikin restrukturisasi...

Tetapi masalah [sebenarnya] adalah restrukturisasi militer, [saya] memberi instruksi baru, memberi inisiatif...Kalau persoalan politik, mari bicara politik dengan benar; kalau persoalan militer, dalam perang komandan yang memerintah.¹²²

110. Resistansi sekarang sepenuhnya adalah perjuangan bersenjata, dengan Falintil memegang peranan utama. Struktur sipil Fretilin disubordinasikan pada Falintil. Para *adjunto* Fretilin sekarang menjadi semacam petugas logistik dan agen intelijen untuk para komandan kompi Falintil. Sebagai partai revolusioner, PMLF agaknya hanya ada di atas kertas. Tidak ada mobilisasi rakyat untuk “membangun struktur-struktur baru yang melayani rakyat” atau untuk “penghancuran total semua bentuk eksploitasi.” Para kader PMLF angkat senjata berjuang sebagai gerilyawan atau menjadi penghubung gerilyawan dengan rakyat untuk mendapatkan bahan makanan, obat-obatan, pakaian, dan informasi tentang gerak musuh.

.....
* Pada 1982, fungsi Comissário Política Nacional dihilangkan dalam ‘Penyesuaian Struktural’ (*Rejustamento Estrutural*). Ini berarti bahwa kedudukan politik tertinggi dalam Fretilin di dalam negeri ditinggalkan oleh Xanana Gusmão, yang sejak itu hanya menjalankan fungsi sebagai panglima Falintil. [Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo, Uma Pátria*, hal. 98; dan Budiardjo dan Liem, hal. xii dan 67-70.]

Strategi

111. Kenyataan baru yang diberikan oleh hancurnya *zonas libertadas* memerlukan pemikiran baru dari pihak Resistansi. Strategi ‘Perang Rakyat Jangka Panjang’ tidak lagi bisa dijalankan. Serangan-serangan gencar tentara Indonesia mengharuskan tentara Falintil berpencar dalam satuan kecil-kecil.’ Setelah dengan sungguh-sungguh kembali mempelajari strategi perang, para komandan dan kader politik yang tersisa menetapkan bahwa perang resistansi terhadap Indonesia selanjutnya adalah perang gerilya. Serangan-serangan dilancarkan oleh satuan-satuan kecil yang bergerak menjelajahi negeri tanpa pangkalan tetap. Informasi intelijen diperoleh dari penduduk sipil di wilayah pendudukan yang diorganisasi dalam sel-sel bawahan (*clandestina*).

112. Serangan-serangan gerilya oleh Falintil memang punya tujuan taktis untuk menghancurkan pasukan tentara Indonesia yang menjadi sasaran, tetapi pada saat yang sama Falintil sadar bahwa tidak akan bisa mengalahkan tentara Indonesia secara militer. Perang resistansi berubah dari tujuan awalnya mengusir agresor Indonesia menjadi menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Falintil masih mampu melancarkan perang resistansi terhadap pendudukan Indonesia dan bahwa rakyat Timor-Leste menginginkan kemerdekaan.[†]

113. Strategi militer ini seiring dengan perubahan pandangan mengenai perundingan. Di masa *zonas libertadas*, Fretilin menolak keras perundingan dengan Indonesia. Salah satu slogan pada masa itu adalah “*Negociação – Não e Nunca*” (“Perundingan – Tidak dan Tidak Akan Pernah”). Dengan kegagalan ‘Perang Rakyat Jangka Panjang’, perlahan-lahan para pemimpin melihat perundingan sebagai sarana untuk mengakhiri pendudukan Indonesia. Pertanda mengenai ini terlihat dengan dilakukannya pertemuan-pertemuan antara pemimpin Resistansi dengan pemimpin tentara Indonesia di Timor-Leste pada Maret – April 1983. Pertemuan-pertemuan tersebut dikenal dengan sebutan “Kontak Dame” (Kontak Damai). Taur Matan Ruak mengenang:

Kami mencari kesempatan untuk bisa mengeksplorasi damai. Karena itu pada tahun 1983 Xanana menerima tawaran untuk melakukan kontak dengan Indonesia...Mereka punya tujuan besar, bagaimana memanfaatkan untuk mengepung kita...Sebaliknya,

* Xanana Gusmão dan Taur Matan Ruak mengatakan bahwa pemecahan pasukan menjadi satuan-satuan kecil awalnya merupakan keadaan yang dipaksakan oleh tentara Indonesia, bukan strategi yang sengaja dirancang oleh pihak Resistansi. [Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, bagian II, Dili, 10 Agustus 2004 dan Taur Matan Ruak, bagian II, Dili, 14 Juni 2004.]

† Satu tinjauan yang dibuat oleh tentara Indonesia pada 1983 tentang strategi Resistansi menyebutkan bahwa tujuan perang yang dilancarkan oleh Fretilin adalah: (a) mempertahankan diri dengan menghindari pertempuran yang menentukan agar punya waktu untuk memulihkan kekuatan, sementara menumbuhkan motivasi yang tinggi dan disiplin yang kuat; (b) memelihara dan mengembangkan jaringan dukungan di wilayah permukiman dan di kota-kota; (c) memperlihatkan kehadiran atau keberadaan mereka, terutama pada bulan-bulan sebelum Sidang Umum PBB; (d) menciptakan kondisi yang membuat ABRI merasa tidak aman di mana pun mereka berada; (e) Menciptakan pangkalan-pangkalan bergerak di banyak wilayah, terutama di desa-desa subur yang sekarang ditinggalkan oleh penghuninya [Lampiran Dokumen 3 dalam Budiardjo dan Liem, *The War against East Timor*, hal. 197.]

*kita berpikir mau memanfaatkan untuk mendapatkan penyelesaian konflik secara damai.*¹²³

114. Dalam berbagai pertemuan Kontak Damai ini pihak Falintil mengajukan usulan tentang penyelesaian konflik melalui perundingan antara pihak Resistansi dengan Indonesia di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagian tuntutan pihak Resistansi, seperti penarikan mundur tanpa syarat tentara pendudukan Indonesia, masih tetap sejalan dengan sikap tak kenal kompromi Fretilin masa *zonas libertadas*. Yang lainnya meliputi pembentukan pasukan penjaga perdamaian PBB di Timor-Leste untuk mengawasi penarikan mundur tentara Indonesia dan mengamankan pemerintah transisional dan dipertahankannya pasukan Falintil “untuk melindungi rakyat dari tekanan.” Resistansi juga mengusulkan referendum untuk menentukan masa depan politik Timor-Leste.¹²⁴ Ini jelas langkah melunak dari sikap resmi yang diambil sejak 1975. Pada waktu itu, Fretilin menegaskan bahwa rakyat Timor-Leste memiliki hak untuk merdeka dan bahwa rakyat telah menyatakan keinginannya itu melalui Proklamasi Kemerdekaan oleh Komite Sentral Fretilin pada 28 November 1975. Dengan mengusulkan referendum sebagai satu cara untuk mengakhiri penguasaan Indonesia atas Timor-Leste, Fretilin kenyataannya mengakui keputusan yang sebelumnya sudah diambil oleh front resistansi diplomatik: bahwa karena Proklamasi Kemerdekaan Fretilin tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pengakuan lebih daripada sepuluh negara, satu-satunya jalan yang terbuka bagi gerakan kemerdekaan tersebut adalah mencari dukungan internasional untuk pelaksanaan hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri (lihat Bab 7.1: Hak penentuan nasib sendiri). Jika sebelumnya upaya diplomasi lebih banyak dilakukan untuk mencari dukungan dari negara-negara blok sosialis dan negara-negara nonblok, sekarang negara-negara blok Barat juga menjadi penting, karena pengaruh kuat mereka pada PBB, termasuk pada Dewan Keamanan PBB (lihat bagian tentang Front Klandestin, pada segmen 5.6: Gerakan bawahanah, paragraf 145 – 170). Gagasan tentang pentingnya perjuangan di medan diplomatik menguat dalam pemikiran Resistansi, sampai-sampai pada sekitar 1984 menjadi pemikiran yang dominan di kalangan pemimpin Resistansi. José da Cosa (Mau Hudu Ran Kadalak), salah seorang anggota penting Komite Sentral PMLF, suatu saat menyatakan bahwa kepemimpinan Resistansi sekarang memusatkan strategi pada dialog dan memindahkan fokus pada front diplomatik, bukan lagi perjuangan bersenjata, meskipun perjuangan bersenjata tetap dilancarkan selama diperlukan.¹²⁵

115. Pada saat yang sama juga berlangsung pergeseran pemikiran lain. Selama beberapa tahun, pandangan dominan di dalam Resistansi menganggap bahwa hanya Fretilin yang memperjuangkan kemerdekaan; dan patriot sejati hanyalah orang-orang Fretilin. Setelah 1982, gagasan bahwa partai lain maupun pengelompokan-pengelompokan yang lain juga bisa ambil bagian dalam perjuangan pembebasan nasional mulai menguat. Salah satu kejadian penting dalam proses ini adalah pertemuan antara Panglima Falintil/Komisaris Politik Nasional, Xanana Gusmão, dengan Administrator Apostolik Dili, Monsignor Martinho da Costa Lopes, di Desa Mehara, Tutuala, Distrik Lautém.

Dalam pertemuan tersebut Dom Martinho mengatakan bahwa persatuan nasional antara Fretilin dan UDT diperlukan untuk keberhasilan perjuangan kemerdekaan. Pada awalnya Xanana Gusmão menolak pandangan ini,¹²⁶ tetapi perlahan-lahan gagasan ini semakin diterima sehingga pada 1983 Komite Sentral PMLF menetapkan Politik Persatuan Nasional (*Unidade Nacional*) sebagai politik resminya.¹²⁶

116. Politik Persatuan Nasional dan gagasan tentang perundingan di bawah pengawasan PBB sebagai cara mengakhiri pendudukan Indonesia atas Timor-Leste mendorong perubahan radikal di bidang ideologi Resistansi yang juga berdampak pada organisasinya. Harapan untuk mendapatkan kerjasama dari partai-partai seperti UDT, terutama pemimpinnya di luar negeri yang menolak integrasi Timor-Leste dengan Indonesia, dengan mudah bisa gagal karena penolakan keras UDT terhadap politik revolusioner Fretilin. Pihak lain yang sangat diperlukan kerjasamanya adalah Gereja Katolik. Sejumlah pastor, termasuk Monsignor Martinho da Costa Lopes, telah memperlihatkan simpatinya pada Resistansi, walaupun tidak pada ideologinya. Hubungan antara Fretilin dengan kalangan Gereja Katolik di masa lalu tidak begitu baik, akibat sikap konservatif Gereja yang tidak bisa menerima berbagai aspek dari politik Fretilin.¹²⁷ Untuk mendapatkan dukungan nyata dari UDT dan Gereja Katolik, PMLF perlu meninggalkan politik revolusionernya. Monsignor Martinho da Costa Lopes mengangkat masalah ini pada pertemuan rahasia dengan Xanana Gusmão di Mehara pada 1982.¹²⁸

117. Penghapusan PMLF terjadi dalam suatu pertemuan Komite Sentral pada April 1984.¹²⁹ Sesudah itu, Marxisme-Leninisme tidak lagi menjadi ideologi Fretilin, politik revolusioner ditinggalkan, prinsip “Perundingan – Tidak dan Tidak Akan Pernah” yang digariskan pada Konferensi Laline 1977 ditinggalkan, dan PMLF kembali lagi menjadi hanya Fretilin.¹³⁰

118. Dengan perubahan tersebut, politik Persatuan Nasional dan perundingan sebagai cara mengalahkan Indonesia menjadi semakin penting dalam perjuangan. Ini berakibat pada semakin menonjolnya CRRN yang bahkan lebih menonjol daripada Fretilin. Walaupun Fretilinlah, ketika masih PMLF, yang merumuskan politik Persatuan Nasional, tetapi pelaksanaannya merupakan urusan CRRN. Ini membuat peranan CRRN lebih penting. Tetapi kenyataannya perjuangan yang dilancarkan di dalam negeri adalah perjuangan bersenjata yang dipimpin Falintil. Karena itu, peran Falintil menjadi lebih menonjol pula dan demikian pula kedudukan Xanana Gusmão sebagai seorang pemimpin militer. Salah satu indikasi dari hal ini adalah keputusan untuk menghapuskan posisi Komisaris Politik Nasional pada 1982.¹³¹

119. Namun, perubahan-perubahan tersebut bukan tanpa tantangan. Sejumlah anggota Komite Sentral, termasuk Kepala Staf Falintil, Kilik Wae Gae, dan Komandan Brigade Merah, Mauk Moruk, menentang keputusan untuk menghapuskan PMLF. Mereka juga menentang politik Persatuan Nasional yang telah ditetapkan tahun

.....
* José da Conceição, yang waktu itu adalah seorang *adjunto*, mengatakan bahwa pada awalnya Xanana Gusmão tidak setuju dengan gagasan ini dan menganggap bahwa persatuan antara Fretilin dengan UDT itu seperti “mengawinkan katak dengan buaya.” [Wawancara CAVR dengan José da Conceição, Dili, 20 Oktober 2004.]

sebelumnya.¹³² Pertentangan ini menimbulkan krisis dalam kepemimpinan Resistansi. Kilik Wae Gae dan kawan-kawan berusaha melancarkan kup terhadap Xanana Gusmão sebagai pemimpin tertinggi perjuangan.¹³³

120. Xanana Gusmão mengatakan bahwa pertentangan tersebut sesungguhnya bukanlah mengenai politik maupun ideologi, tetapi berhubungan dengan keputusannya untuk melakukan perombakan struktur militer. Sejumlah unit pasukan di bawah pemimpin Kilik Wae Gae, Mauk Moruk, dan Ologari Assuwain yang bertempat di Sektor Tengah tidak aktif melakukan penyerangan terhadap tentara Indonesia, padahal pada saat yang sama pasukan-pasukan Falintil di Sektor Timur sedang menghadapi serangan bertubi-tubi tentara Indonesia. Panglima Falintil Xanana Gusmão merombak beberapa posisi komando, menurunkan jabatan sejumlah komandan yang membangkang ke tingkat operasional. Kilik Wae Gae diturunkan dari Kepala Staf Falintil menjadi Komandan Brigade Merah. Mauk Moruk diturunkan dari Komandan Brigade Merah menjadi komandan salah satu kompi, demikian pula wakil Mauk Moruk, Ologari Assuwain. Dalam kesaksiannya kepada Komisi, Xanana Gusmão mengatakan:

Saya melakukan restrukturisasi. Mauk Moruk bukannya membuat rencana nyata memimpin kompi, tapi duduk saja di atas gunung. Pasukan di sekelilingnya mengamankan. Saya bilang, "Kau ingin pimpin satu kompi, kalau begitu pegang kompi." Ologari yang menjadi Komandan Pertama duduk saja tidak melakukan apa-apa. Saya bilang, "Kamu juga jadi komandan kompi." Karena [perubahan] ini mereka menyebut saya pengkhianat, tidak lagi Marxis. Mereka pegang ideologi, dengan demikian membuatnya menjadi masalah. Tetapi masalah [sebenarnya] adalah restrukturisasi militer. Saya memberi perintah baru, memberi inisiatif baru kepada kompi. Memberi orientasi kepada kompi-kompi, "Sekarang cari musuh dan bunuh."¹³⁴

121. Saksi-saksi lain juga mengatakan bahwa restrukturisasi itu menimbulkan persoalan.¹³⁵ Cornelio Gama (Leki Nahak Foho Rai Boot), yang pada waktu itu menjadi seorang komandan kompi memberikan kesaksian kepada Komisi:

Terjadi pro-kontra tentang PMLF. Ada juga masalah komandan-komandan senior yang tidak mendapatkan kedudukan, bahkan sebagian besar dari mereka diturunkan dari jabatan. Seperti Mauk Moruk yang sebelumnya Komandan Brigade Negra [Brigada Vermelha] dan Ologari Assuwain yang sebelumnya Wakil Komandan Brigade Negra [Brigada Vermelha], serta Kilik Wae Gae yang sebelumnya Kepala Staf Umum. Kilik menjadi Komandan Brigade Negra [Brigada Vermelha], sedang Mauk Moruk dan Ologari masing-masing menjadi Komandan Region.¹³⁶

122. Taur Matan Ruak, yang pada waktu itu staf Kepala Staf Falintil, mengemukakan "ketidakhormatan" dari gerakan Kilik dan kawan-kawan. Taur Matan Ruak mengenang:

Ketika Presiden [Xanana Gusmão] membentuk Partai Marxis-Leninis, mereka mengatakan, “Partai Marxis-Leninis bukan politik yang benar dan lebih baik demokrasi sosial.” Kemudian ketika ke demokrasi sosial, mereka mengatakan, “Ini tidak baik, Partai Marxis-Leninis yang baik.” Semua tidak baik, maunya apa?

Secara mendasar kalau orang membela suatu ideologi atau suatu teori atau pandangan, wajarnya ia harus punya kemampuan untuk membelanya. Jadi secara intelektual siap untuk mempertahankan pandangannya. Tetapi ia tidak mempertahankannya dan kemudian meloncat ke sana-kemari. Seperti itu kasus kami itu. Tidak tahu kita sebut apa, kita namakan apa yang baik...Saya lihat ada ketidakmurnian.¹³⁷

123. Mauk Moruk menyebut sebab penentangan oleh Kilik dan kawan-kawan adalah keinginan Xanana Gusmão untuk membawa keluar Falintil dari Fretilin.¹³⁸ Apa pun sebab pertentangan antara kedua belah pihak, yang terjadi kemudian sejumlah komandan dan pemimpin politik yang bermasalah dengan Xanana Gusmão meninggal atau menyerah bersama pasukan kepada tentara Indonesia. Kelompok pembangkang menyingkir. Kilik Wae Gae dan Okan akhirnya mati dalam pertempuran melawan tentara Indonesia. Mauk Moruk* akhirnya menyerah kepada tentara Indonesia, begitu pula Ologari Assuwain.¹³⁹

124. Kematian dan menyerahnya para penentang Politik Persatuan Nasional, membuat menguatnya kedudukan Xanana Gusmão sebagai pemimpin Resistansi. Komite Sentral memecat Kilik Wae Gae dan Mauk Moruk. Panglima Falintil sekaligus menjalankan fungsi Kepala Staf Falintil, yang kosong karena pemecatan Kilik Wae Gae.¹⁴⁰ Tetapi menghilangnya para penentang Persatuan Nasional tidak serta-merta membuat CRRN menjadi wadah yang efektif untuk persatuan nasional. UDT khususnya, tetap tidak menerima CRRN. Taur Matan Ruak mengengang:

Ada penafsiran yang berbeda-beda mengenai CRRN...Misalnya UDT mengatakan, “Conselho Revolucionária... [istilah] “Revolucionária” itu datang dari mereka yang Marxis-Leninis...Jadi mereka [punya] definisi sendiri. Mengenai bidang yang juga penting, mengenai strategi, strategi penyelesaian konflik, jadi solusi konflik...Ini membutuhkan konsensus...Konsensus hanya ada dalam resistansi bersenjata. Tetapi di sektor politik, mereka yang di luar negeri, mereka yang ada hubungan, misalnya Delegasi [Luar Negeri] Fretilin di sana lebih berhubungan dengan CRRN, mereka menerima, tetapi misalnya UDT tidak menerima dan mereka yang lain tidak menerima...¹⁴¹

* Aleixo Ximenes menyampaikan kepada Komisi bahwa sebelum menyerah, Mauk Moruk mengirimkan surat kepada Aleixo Ximenes yang menyebutkan bahwa Xanana Gusmão akan membunuhnya kalau mengetahui dirinya mengirimkan surat untuk menyerah. Waktu bertemu Aleixo Ximenes, Mauk Moruk mengatakan bahwa Kilik menyingkir dan akan mati kalau bertemu dengan Xanana Gusmão maupun kalau bertemu dengan ABRI. [Wawancara CAVR dengan Aleixo Ximenes, Dili, 2 Februari 2004.]

125. Hal ini kemungkinan yang menyebabkan mengapa kepemimpinan CRRN tetap saja berasal dari Fretilin. Seorang wakil Resistansi di Australia menyebutkan bahwa CRRN tidak efektif karena pertikaian internal para pemimpin Resistansi “ditambah kurangnya tenaga untuk resistansi dan serangan Indonesia.”¹⁴² Meskipun demikian, terjadi sedikit kemajuan ke arah persatuan nasional pada Maret 1986 dengan dicapainya kesepakatan di Lisbon, Portugal oleh pemimpin Fretilin dan UDT untuk bersatu dalam perjuangan diplomatik untuk kemerdekaan Timor-Leste. Ini kemudian dikenal dengan sebutan Konvergensi Nasionalis (*Convergência Nacionalista*).¹⁴³ Namun, lagi-lagi kesepakatan ini terbukti rentan karena tetap adanya saling curiga dan sikap sektarian di kalangan yang mewakili Fretilin dan UDT di luar negeri. Dalam tinjauannya ke masa itu Xanana Gusmão mengemukakan:

Tahun 1986, Konvergensi Nasionalis dibentuk sebagai upaya untuk menghilangkan suasana kecurigaan yang ada antar partai-partai politik tetapi, sekali lagi, maksud baik tidak cukup untuk menciptakan keselarasan antara tujuan-tujuan kita yang berbeda.¹⁴⁴

Falintil pasca-1987

126. Pada 1987, Panglima Falintil, Xanana Gusmão, membuat keputusan penting untuk menjadikan Falintil suatu badan nonpartai politik, dengan mengeluarkan sayap militer gerakan kemerdekaan ini dari struktur Fretilin. Keputusan yang disebut ‘Penyesuaian Struktural Resistansi’ (*Reajustamento Estrutural da Resistência*) itu diambil dalam suatu pertemuan di Aitana (Lacluta, Viqueque). Pertemuan tersebut juga menegaskan bahwa kepemimpinan Resistansi harus selalu berada di dalam negeri dan bahwa Xanana Gusmão, sebagai Panglima Falintil, mundur dari Fretilin.¹⁴⁵ Memotong Falintil dari akar partai politiknya dimaksudkan untuk membuat front bersenjata itu menjadi kekuatan nasional yang sejati dan untuk mengkonsolidasikan peran kepemimpinannya dalam Resistansi. Sebelumnya, perjuangan melawan pendudukan Indonesia secara resmi dipimpin oleh CRRN, dengan Fretilin sebagai pelopornya. Dengan semakin ditonjolkannya Politik Persatuan Nasional oleh pemimpin Resistansi di dalam negeri, CRRN menjadi semakin mengemuka sebagai pembawa kepentingan nasional yang lebih luas. Sebaliknya, Fretilin dianggap lebih sempit dan partisan. Karena resistansi nyata terhadap pendudukan Indonesia yang dilancarkan di dalam negeri hanya berupa perjuangan bersenjata, maka Falintil menjadi yang dominan dalam CRRN, dengan para komandan Falintil memimpin perjuangan itu. Akibatnya, Falintil dipandang sebagai satu-satunya organisasi yang benar-benar berjuang untuk kepentingan nasional.

127. Keluarnya Falintil dari Fretilin memperlihatkan pendekatan baru yang dilakukan oleh Xanana Gusmão dalam menjalankan Politik Persatuan Nasional. Pendekatan sebelumnya berusaha mempersatukan Fretilin dan UDT dalam CRRN. Tetapi pendekatan ini tidak berhasil karena perbedaan di dalam dan di antara kedua partai itu. Salah satu penghambat adalah apa yang dipandang sebagai “radikalisme” Delegasi Fretilin dalam Tugas Luar Negeri (*Delegação da Fretilin em Serviço*

no Exterior, DFSE).¹⁴⁶ Pengutamaan pendekatan baru ini pada Falintil sebagai organisasi yang nonpartisan yang berjuang melawan pendudukan Indonesia atas Timor-Leste pada awalnya mendapatkan tentangan. Lere Anan Timor, pada waktu itu salah seorang komandan Falintil, mengenang:

Falintil keluar dari Fretilin dengan pesan Katuas Xanana pada 7 Desember 1987... Waktu itu saya bersama dengan Mau Hudu... Mau Hudu bertanya, "Katuas Xanana telah memberikan pesan itu... tentang keluar dari partai... tentang pembatalan Partai Marxis-Leninis. Pandangan kita bagaimana? Bagaimana menjelaskannya?" Saya bilang, "Kau yang menjelaskan. Kau yang harus menjelaskan, [karena] kau yang Komisaris Politik. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya." Ini masalah besar...

Kami mundur ke suatu tempat dekat Vemasse, malam hari kami bikin rapat. Dia [Mau Hudu] panggil saya, saya tidak mau. Tempat pertemuan itu dekat [sehingga saya bisa mendengar]. Mereka mulai berdiskusi. Banyak komandan tidak mau menerima, [mereka bilang], "Banyak rakyat mati, kita menderita, kita kehilangan keluarga, banyak yang mati... Mengapa sekarang bilang begitu? Sekarang pemimpin main-main!"

Mereka tidak mau Falintil keluar dari Fretilin. Tidak mau Partai Marxis-Leninis dihapuskan. Tetapi, perlahan-lahan, dengan perkembangan keadaan, mereka menerima. Dengan penjelasan-penjelasan, mereka [akhirnya] menerima.¹⁴⁷

128. Langkah lebih lanjut 'Politik Persatuan Nasional' ke arah ini adalah pembentukan Dewan Nasional Resistansi Maubere' (Concelho Nacional da Resistência Maubere, CNRM) untuk menggantikan CRRN pada Desember 1988. Dewan ini diarahkan oleh sepuluh orang anggota, yang terdiri atas tiga orang dari komando Falintil, lima orang dari front perjuangan bawahan dan dua orang dari Fretilin.¹⁴⁸ Panglima Falintil Xanana Gusmão yang sekarang bukan lagi anggota Fretilin, menjadi pemimpin tertinggi CNRM dengan sebutan 'penanggungjawab utama' (*responsável principal*). Wewenang *responsável principal* CNRM sangat besar karena pemegang kedudukan ini punya "kekuasaan penuh untuk mengurus persoalan Timor-Leste bahkan di arena internasional."¹⁴⁹

129. Sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh pemimpin Resistansi di dalam negeri, dibentuk Delegasi Resistansi dalam Tugas Luar Negeri (Delegação da Resistência em Serviço no Exterior, DRSE) untuk menjalankan kegiatan-kegiatan resistansi di luar negeri. Abilio Araújo (Sekretaris Jenderal Fretilin), Moisés Amaral, dan mantan Uskup Dili yang lantang bersuara, Dom Martinho Costa Lopes, secara bersama-sama ditunjuk menjadi penanggungjawab DRSE.

* 'Maubere' adalah nama umum laki-laki Timor-Leste dan pertama kali digunakan oleh José Ramos Horta untuk menyebut orang biasa Timor-Leste. Kata ini kemudian digunakan oleh Fretilin. (Lihat Bagian 3: Sejarah konflik.)

Struktur baru ini menggantikan DFSE.¹⁵⁰ Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat pendekatan nonpartisan dan memerangi apa yang dianggap sebagai tidak efektifnya DFSE,¹⁵¹ yang disebabkan oleh konflik di dalam tubuh kepemimpinannya. Tetapi penggantian ini ditolak oleh DFSE, yang menanggapinya dengan mengubah diri menjadi Delegasi Luar Negeri Fretilin (Delegação Externa da Fretilin, DEF).¹⁵²

130. Dokumen RER atau “Reajustamento Estrutural da Resistência e Proposta da Paz” (Penyesuaian-Ulang Struktural Resistansi dan Usulan Perdamaian) menyebutkan bahwa CNRM menggabungkan dua organ, yaitu DRSE dan Komando Falintil. Komando Falintil disebutkan menjalankan fungsi CNRM di dalam negeri, sementara DRSE berfungsi di luar negeri melalui kegiatan representasi diplomatik, penyebaran informasi, kegiatan kebudayaan, dan pengorganisasian serta pemberian bantuan kepada pengungsi Timor-Leste di luar negeri.¹⁵³

131. Pada 1989, Xanana Gusmão menunjuk José Ramos-Horta sebagai wakil khusus CNRM dan wakil pribadinya di luar negeri.¹⁵⁴ Sebelumnya, José Ramos-Horta mengundurkan diri dari kedudukannya dalam DEF untuk berkonsentrasi mewakili CNRM pada PBB dan lain-lainnya. Sejak saat itu, perjuangan Resistansi di luar negeri dilakukan oleh CNRM dan peran Fretilin dalam perjuangan di tingkat internasional sebenarnya tidak ada lagi. Konsolidasi kepemimpinan CNRM pada tingkat internasional diperkuat lebih lanjut dengan pengangkatan orang-orang yang bukan dari partai politik pada posisi-posisi penting di beberapa negeri.[†]

132. Pengangkatan José Ramos-Horta sebagai wakil khusus CNRM di luar negeri dan selanjutnya konsolidasi kepemimpinan CNRM pada tingkat internasional, membuahkan hasil kemajuan dalam perjuangan diplomatik. Melalui usaha-usaha wakil-wakil CNRM di luar negeri, bisa dicapai persatuan tertentu antara Fretilin dan UDT, yang berhasil bekerjasama melancarkan inisiatif perjuangan diplomatik bersama. Misalnya, pada Maret 1995, sebagai persiapan untuk menghadiri pertemuan Dialog Menyeluruh Antar-Orang Timor (All-Inclusive Intra East Timorese Dialog, AIETD), para pemimpin CNRM, Fretilin, dan UDT mengadakan pertemuan resmi untuk menyusun strategi bersama.¹⁵⁵ Pada September 1996, delegasi gabungan dari ketiga organisasi ini mengunjungi Afrika Selatan untuk bertemu dengan Kongres Nasional Afrika (African National Congress, ANC), serikat-serikat buruh, dan anggota-anggota Parlemen dalam rangka menggalang dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Timor-Leste.[‡] Sebagai pengakuan bagi upaya-upaya tersebut, Xanana

* Satu sumber menyebutkan bahwa alasan keluarnya Ramos-Horta dari Fretilin adalah “tidak semua anggota Delegasi Luar Negeri [Fretilin] aktif dalam perjuangan.” [“Fretilin: Roots of Friction,” *Fitun* (London), No. 11, September 1993.]

† Misalnya pada 1990-an wakil CNRM untuk Australia dan Selandia Baru adalah Abel Guterres; untuk Amerika Serikat, Constâncio Pinto; untuk Kanada, Abe Barreto; untuk Eropa, José Amorim Dias; dan untuk Portugal, Luis Cardoso. [“East Timorese in the Diaspora,” <http://www.uc.pt/timor/diaspora.htm>.]

‡ Delegasi tersebut terdiri atas José Ramos-Horta (Wakil Khusus CNRM), João Carrascalão sebagai (Ketua UDT), dan Roque Rodrigues (Duta Besar Republik Demokratik Timor-Leste di Luanda, Angola). [African National Congress, “East Timorese Visit,” dalam situs African National Congress (ANC): <http://>

Gusmão dalam satu pesannya pada 1994 menyebutkan Fretilin dan UDT sebagai “partners” (mitra) CNRM.¹⁵⁶

133. Walaupun dilakukan upaya-upaya untuk membuat CNRM sebagai front nasional yang luas dan bersifat nonpartisan, masih ada penolakan politik pada CNRM sebagai pemimpin perjuangan. Xanana Gusmão mencatat:

...kami membuat janji kepada rakyat untuk menjunjung dengan kuat prinsip “Bersatu agar bisa melawan dengan lebih baik!” Bersama-sama dengan rakyat kita, yang mudah memahami tujuan CNRM, kami siap menerima segala konsekuensi. Tetapi ada distorsi dalam cara memandang CNRM. Ia dipandang sebagai suatu partai dan secara salah dianggap sebagai pemain lain di panggung. Akan lebih baik jika tidak demikian...¹⁵⁷

134. Meskipun Xanana Gusmão tidak menyebut secara langsung pihak mana yang memandang CNRM dengan “distorsi,” jelas yang dimaksudkannya adalah UDT. Hingga saat itu, UDT masih menganggap bahwa CNRM adalah bentuk lain dari Fretilin dan belum mau mengakui bahwa Xanana Gusmão adalah pemimpin tertinggi Resistansi. Francisco Guterres (Lu Olo) yang saat itu menjadi wakil sekretaris Fretilin di dalam negeri mengenang:

...lebih dari sepuluh tahun CNRM terus-menerus meneriakkan persatuan nasional, tetapi persatuan nasional belum juga ada. Kami yang mati tetap tinggal di hutan, musuh setiap hari terus membunuh kami, jadi sebenarnya orang di kota itu mau apa? Sampai akhirnya kami mengerti bahwa yang lebih buruk daripada Marxis-Leninis itu adalah [kata] “Maubere.” Karena itu, diubah menjadi CNRT di Peniche, untuk mengatakan bahwa CNRT yang lebih baik.¹⁵⁸

135. Kemajuan dalam mencapai persatuan baru terjadi dengan dilaksanakannya Konvensi Nasional Bangsa Timor di Peniche, Portugal, April 1998. Pada pertemuan tersebut dicapai beberapa hal penting. Pertama, dibentuk Dewan Nasional Resistansi Rakyat Timor (Conselho Nacional da Resistência Timorese, CNRT), yang tidak hanya mencakup Fretilin dan UDT, tetapi juga partai-partai politik lain seperti KOTA dan Apodeti (pro-referendum), serta kelompok-kelompok bukan partai politik seperti Gereja. Kedua, Xanana Gusmão diakui sebagai *líder máximo* (pemimpin tertinggi) dan dipilih menjadi Ketua CNRT. Dua orang ditunjuk menjadi wakil ketuanya, José Ramos-Horta di luar negeri dan wakil ketua rahasia di dalam negeri, Mario Carrascalão. Terakhir, kata ‘Maubere’ dalam CNRM yang oleh kalangan UDT dianggap identik dengan Fretilin dan mengandung pengertian revolusioner, digantikan dengan kata ‘Timorese’ (bangsa Timor).

136. Dalam CNRT yang baru dibentuk ada tiga organ, yaitu Komisi Politik Nasional, Komisi Eksekutif, dan Komisi Yurisdiksi. Xanana Gusmão menjadi ketua Komisi

www.anc.org.za/ancdocs/pr/1996/pr0910b.html].

Politik Nasional, sementara José Ramos-Horta menjadi ketua Komisi Eksekutif. Dalam Komisi Politik Nasional, duduk wakil partai, organisasi nonpartai, dan seorang pastor; dalam Komisi Eksekutif juga masuk orang-orang dari partai politik maupun bukan partai politik, sementara Komisi Yurisdiksi beranggotakan para pakar teknis.¹⁵⁹ Ada 22 orang yang dipilih ke dalam ketiga badan tersebut di Peniche. Semuanya berada di luar Timor-Leste.*

137. Keluarnya Falintil dari Fretilin dan pembentukan CNRM semakin menegaskan peran kepemimpinan Falintil dalam perjuangan. Ini diperkuat dalam dokumen RER “Reajustamento Estrutural da Resistência e Proposta da Paz” yang menyebutkan bahwa kompetensi Komando Falintil adalah:

- membuat keputusan tentang strategi umum;
- memberikan orientasi politik umum;
- melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.¹⁶⁰

138. Dengan wewenang seperti itu, Komando Falintil menjadi pemimpin politik dan militer dari perjuangan yang menyusun strategi umum arah politik perjuangan diplomatik di luar negeri dan melancarkan perjuangan bersenjata melawan tentara pendudukan Indonesia. Peran Falintil dalam seluruh perjuangan ini terungkap dari kata-kata Taur Matan Ruak berikut ini: “Ada tiga front [perjuangan]: Front Diplomatik dan Front Klandestin mendapatkan perintah dari Front Bersenjata.”[†] Dalam pidato di Uaimori (Viqueque) pada hari ulang tahun Falintil Agustus 2003, Xanana Gusmão menegaskan kepemimpinan Falintil:

...diputuskan pada 1987 untuk mengubah Falintil menjadi suatu badan nonpartisan sehingga bisa menjadi landasan fundamental untuk memperkuat resistansi seluruhnya, yang dengan demikian mampu memimpin perjuangan sampai kemenangan akhir...¹⁶¹

* Anggota Komisi Politik Nasional yang dipilih di Peniche beranggotakan Xanana Gusmão, José Ramos-Horta, João Carrascalão, Padre Francisco Fernandes, Mari Alkatiri, Ana Pessoa, Alberto Araújo, dan Domingos Oliveira, serta empat orang anggota pengganti: Estanislau da Silva, Agio Pereira, Vicente Guterres, dan Zacarias da Costa. Selanjutnya pada September 1998, 12 orang anggota Komisi Politik Nasional dipilih di Timor-Leste berdasarkan keputusan oleh Xanana Gusmão yang sebagai ketua CNRT mendapatkan mandat untuk menyusun struktur CNRT di dalam negeri: Abel da Costa Belo, David Dias Ximenes, Domingos F.J. Sousa, Leandro Isaac, João Baptista Fernandes Alves, Leão P. Dos Reis Amaral, Lu Olo, Manuel Viegas Carrascalão, Paulo Freitas da Silva, Taur Matan Ruak, Francisco Lopes Carvalho, dan Lucas da Costa (yang berada di Indonesia). Komisi Eksekutif terdiri atas José Ramos-Horta, José Luis Guterres (memimpin Departemen Hubungan Luar Negeri), Manuel Tilman (memimpin Departemen Administrasi dan Sumberdaya), Roque Rodrigues (Dinas Pusat), Emilia Pires (Dinas Regional), Pascoela Barreto (Keuangan dan Sumberdaya), dan Rama Metan (Departemen Pemuda). Komisi Yurisdiksi beranggotakan Carlos Alberto Barbosa, Jerónimo Henriques, Alfredo Borges Ferreira, dan Filomeno Andrade. [CNRT – National Council of Timorese Resistance (<http://www.labyrinth.net.au/~ftimor/cnrt.html>)]

† Wawancara CAVR dengan Taur Matan Ruak, Bagian II, Dili, 14 Juni 2004. José da Conceição (mantan *adjunto* setelah hancurnya *zonas libertadas*) mengatakan, “Setelah *roptura* [penduduk sipil berpisah dari Falintil] yang dominan adalah militer. Kader sipil tugasnya mendukung militer. Meskipun tujuannya sama, yaitu kemerdekaan.” [Wawancara CAVR dengan José da Conceição, 20/10/2004.]

Struktur Falintil 1987 sampai 1999

Komando Falintil berada di bawah pimpinan Xanana Gusmão sebagai panglima (*comandante-em-chefe*). Ia sekaligus menjalankan fungsi kepala staf umum (*chefe do estado maior*), yang membawahi wakil kepala staf (*sub-chefe do estado maior*), Taur Matan Ruak; penasihat politik (*conselheiro político*), Mau Hudu; dan penasihat militer (*conselheiro militar*), Mau Hunu Bolerek Karantaianu.¹⁶² Di bawah mereka, beroperasi pasukan-pasukan gerilya dalam satuan kecil yang terdiri atas empat sampai delapan orang. Pada masa CNRM, pembagian wilayah perjuangan bersenjata sama dengan masa CRRN. Seluruh wilayah dibagi menjadi tiga *region*, yaitu Ponta Leste, Centro, dan Fronteira. Di setiap *region* ini beroperasi beberapa satuan gerilya yang dipimpin oleh seorang komandan *region*.

Antara akhir dasawarsa 1980-an dan awal dasawarsa 1990-an agaknya adalah masa yang sulit bagi Falintil. Panglima Xanana Gusmão di kemudian hari menyebutkan bahwa jumlah mereka seluruhnya kurang daripada seratus orang.¹⁶³ Menurut laporan tentara Indonesia sekitar waktu itu, di Ponta Leste jumlah seluruh gerilyawan adalah 67 orang, dengan senjata 45 pucuk senapan, dan beroperasi dalam kelompok-kelompok beranggotakan enam orang.¹⁶⁴ Tetapi setelah terjadinya Pembantaian Santa Cruz 12 November 1991, kekuatan Falintil meningkat dari 143 gerilyawan dengan 100 pucuk senapan, menjadi 245 gerilyawan dengan 130 pucuk senapan.¹⁶⁵

Pada dasawarsa 1990-an terjadi beberapa kali perubahan dalam Komando Falintil akibat tertangkapnya beberapa anggotanya oleh tentara Indonesia. Mau Hudu, penasihat politik Kepala Staf ditangkap pada Januari 1992. Setelah penangkapan Xanana Gusmão pada November 1992, penasihat militer CNRM Mau Hunu mengambil alih komando Falintil. Tetapi tidak lama kemudian ia juga ditangkap oleh tentara Indonesia pada 3 April 1993. Konis Santana (Sekretaris *Comissão Directiva da Fretilin*, organ tertinggi Fretilin di dalam negeri) mengambilalih komando sampai kematiannya pada Maret 1998. Walaupun terjadi perubahan-perubahan tersebut, kedudukan panglima Falintil dan ketua CNRM tetap di tangan Xanana Gusmão yang berada dalam penjara Indonesia di Jakarta.

Pada 1998, dilakukan perubahan pembagian wilayah. Wilayah negeri dibagi menjadi empat *region*, dengan *Região 1* mencakup wilayah Lautém dan sebagian besar Baucau; *Região 2* mencakup sebagian Baucau, Viqueque, dan sebagian Manatuto; *Região 3* meliputi Dili, Aileu, Ainaro, dan sebagian Manatuto; dan *Região 4* meliputi wilayah Ermera, Liquiçá, Bobonaro, dan Covalima.

Kekuatan Falintil yang hanya sekitar 300 orang pada awal 1998 meningkat menjadi sekitar 1.500 orang pada akhir Agustus 1999.¹⁶⁶ Pada pertengahan 1998 terjadi penambahan pesat gerilyawan karena beberapa hal seperti kembalinya bekas pejuang gerilya ke kesatuannya, pemuda aktivis *clandestina* yang lari ke hutan menghindari penangkapan oleh tentara Indonesia, dan kekerasan oleh milisi antikemerdekaan dan pembelotan orang-orang Timor-Leste yang berdinamika pada tentara Indonesia.

139. Walaupun kepemimpinan perjuangan Resistansi berada pada Frente Armada, tetapi strategi Falintil untuk memenangi perjuangan bukanlah strategi militer. Para komandan Falintil dan pemimpin politik sadar bahwa mereka tidak punya kemampuan militer untuk mengalahkan tentara Indonesia, yang jauh lebih unggul dalam hal kekuatan pasukan maupun persenjataan. Bagi pemimpin Falintil, kunci untuk memenangi perjuangan adalah diplomasi internasional. Invasi dan pendudukan Indonesia terhadap Timor-Leste melanggar hukum internasional dan karena itu integrasi Timor-Leste ke dalam negara Republik Indonesia tidak mendapatkan pengakuan internasional.

140. Pada 1989, CNRM mengajukan rencana perdamaian yang mengusulkan suatu proses di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akhirnya mengarah pada penyelenggaraan referendum, dan melalui referendum ini rakyat Timor-Leste dapat menjalankan hak mereka atas penentuan nasib sendiri. Proses tersebut digambarkan meliputi:

- penarikan mundur pasukan tentara Indonesia;
- perlucutan senjata secara serentak atas pasukan gerilya Falintil dan kelompok-kelompok paramiliter yang dipersenjatai oleh tentara Indonesia;
- pembentukan pemerintah transisi yang akan menentukan tanggal pemungutan suara penentuan status politik Timor-Leste;
- pembuatan kesepakatan kerjasama antara pemerintah transisi dengan Indonesia, Australia, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan negara-negara lain untuk menjamin perkembangan Timor-Leste yang pesat dan harmonis;
- Pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional untuk periode 5 – 15 tahun yang diakhiri dengan pelaksanaan referendum dan penyerahan kedaulatan.¹⁶⁷

141. CNRM yakin bahwa melalui dialog, semua pihak yang berkonflik bisa diyakinkan mengenai perlunya menyelenggarakan referendum penentuan nasib sendiri. Perjuangan untuk mendapatkan dukungan internasional menjadi dipandang lebih penting daripada kemenangan di medan perang. Resistansi bersenjata masih

* Salah satu premis dasar pembentukan CNRM adalah bahwa penyelesaian masalah Timor-Leste terletak

terus dilancarkan, tetapi tujuannya bukanlah untuk memenangi perang, melainkan hanya untuk memberikan bobot tuntutan resistansi yang lebih luas. Agio Pereira menggambarkan peran perjuangan bersenjata sebagai berikut:

Di dalam Timor-Leste, *Frente Armada* (Front Bersenjata) akan menggalang rakyat untuk melanjutkan perjuangan untuk waktu yang lamanya sesuai yang diperlukan, untuk sekurang-kurangnya mempertahankan suatu keadaan macet di medan tempur sehingga front diplomatik bisa maju dengan suatu penyelesaian yang memenuhi keinginan rakyat Timor-Leste dan bisa diterima secara internasional.¹⁶⁸

142. Mantan wakil sekretaris Fretilin, Francisco Guterres (Lu Olo), mengatakan kepada Komisi mengenai strategi tersebut:

... ini mendefinisikan strategi konkret penyelesaian konflik melalui perundingan, ini strategi keseluruhannya. Penyelesaian melalui perundingan tidak berarti bahwa kita membawa militer untuk memenangkan perang, karena kalau militer saja kita tidak bisa [menang]. Ini merupakan jenis perwujudan pasukan untuk mempertahankan [keberadaan] tentara. Kepada tentara Indonesia, [kita] mengatakan siap melakukan ofensif dengan defensif. Tetapi, kita tidak boleh membandingkan tentara kita untuk menjalankan prinsip itu, tipe militer itu. Kita melancarkan [perang] gerilya untuk menciptakan keadaan objektif dan real politik militer agar bisa mencapai tujuan membebaskan tanah-air.¹⁶⁹

143. Serangan-serangan gerilya Falintil terhadap sasaran-sasaran Indonesia dilakukan lebih untuk tujuan taktis, untuk mendapatkan senjata dan peralatan perang lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan keberadaan Falintil. Tujuan lain adalah untuk menimbulkan kelelahan psikis di kalangan tentara Indonesia. Namun secara strategis, tujuan serangan-serangan gerilya Falintil tidak bersifat militer melainkan politik. Panglima Falintil terakhir Taur Matan Ruak mengatakan kepada Komisi:

Kita kalau mengevaluasi keadaan itu...kita evaluasi setiap hari, tentang [keadaan] internasional, terutama mengevaluasi kejadian-kejadian yang penting, pemilihan parlemen [Indonesia], pemilihan presiden [Indonesia], tanggal 20 Mei, penarikan pasukan. Pada kejadian-kejadian itu, tindakan kecil bisa memberikan dampak yang besar. Karena itu normal...mengevaluasi berdasarkan kejadian-kejadian itu. Dengan demikian, tepatnya agar tidak terjadi kesan kepada orang

.....
pada perjuangan di arena internasional, bukan perjuangan bersenjata. [Agio Pereira, "The National Council of Maubere Resistance [CNRM], Overview of the History of the Struggle of East Timor," makalah yang disampaikan pada suatu pertemuan solidaritas, Sydney, Agustus 1994.]

bahwa keadaan aman, karena itu harus membuat gangguan, selalu membuat sesuatu.

Ini bisa dibilang kontra-kampanye terhadap kampanye mereka yang mengatakan keadaan baik. Karena tindakan itu untuk mendestabilkan keadaan. Karena itu, operasi-operasi itu normalnya punya tujuan. Satu tujuan ekonomi, kita membuat mereka menghabiskan makanan, uang, menghabiskan kertas-kertas, menghabiskan pakaian untuk kami...Di bidang diplomatik memberikan imbas pada rencana internasional...tetapi imbasnya di sini. Imbasnya militer mengeluarkan senjata, mengeluarkan barang-barang. Jadi begitu imbas pada aspek diplomatik, bagaimana kita bisa menyampaikan keadaan [yang dianggap] aman agar orang mendapatkan gambaran bahwa di sana perang masih berlangsung.¹⁷⁰

144. Falintil melancarkan serangan-serangan dengan tujuan memberikan dampak pada perjuangan diplomatik, memberikan gambaran kepada dunia bahwa di Timor-Leste perang masih berlangsung dan dunia internasional harus mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Sejak gencatan senjata 1983, CRRN dan kemudian CNRM menyatakan kesediaan mereka untuk dilucuti senjatanya apabila dilaksanakan penyelesaian damai berupa referendum penentuan nasib sendiri. Ketika penyelesaian melalui jalan diplomatik mulai mendapatkan kemajuan dan Presiden Habibie mengusulkan referendum untuk menentukan status masa depan Timor-Leste, serangan Falintil pun menjadi sangat berkurang dan berakhir, dan selanjutnya pada Agustus Falintil secara sepihak memutuskan melakukan kantonisasi pasukan, seperti yang digariskan dalam Kesepakatan 5 Mei 1999 mengenai penyelenggaraan referendum.*

Gerakan perjuangan bawahanah

145. Sejarah gerakan bawahanah selama pendudukan Indonesia sangat kompleks dan karena sifat gerakan ini, sangat sedikit yang telah ditulis mengenai struktur dan strategi gerakan ini. Tinjauan berikut ini disusun berdasarkan pada wawancara dengan para mantan anggota Resistansi, tetapi Komisi mencatat perlunya dilakukan banyak penelitian lebih lanjut mengenai segi yang memikat dari sejarah Timor-Leste ini.

146. Komisi telah mendengar bahwa kegiatan bawahanah telah dimulai pada tahun-tahun awal invasi Indonesia. Kader-kader Fretilin dan anggota keluarga

* Kantonisasi sukarela pasukan-pasukan Falintil diselesaikan pada 12 Agustus 1999 sebelum pelaksanaan Jajak Pendapat 30 Agustus. Kantonisasi untuk *Região* 1 berada di Atalari (Laga, Distrik Baucau), untuk *Região* 2 dan *Região* 3 bertempat di Uaimori (Distrik Manatuto), untuk *Região* 4 bertempat di Poetete (Distrik Ermera) dan Odelgomo (Desa Aiasa, Distrik Bobonaro). Menurut keterangan Falintil kepada UNAMET, 187 gerilyawan ditempatkan di Aiasa, 153 di Poetete, 260 di Uaimori, dan 70 di Atalari, sehingga seluruhnya berjumlah 670 orang. [D. Greenlees dan R. Garran, *Deliverance: The Inside Story of East Timor's Fight for Freedom*, Crows Nest, Allen & Unwin, 2002, halaman 182; Martin, *Self-Determination for East Timor*, hal. 72-73; lihat pula Bagian 3: Sejarah konflik.]

mereka yang berada di Dili dan kota-kota lain, berorganisasi dalam kelompok-kelompok kecil dan berusaha memberikan bantuan kepada para pejuang di hutan dengan memberikan bahan makanan, obat-obatan, pakaian, dan informasi tentang keadaan di kota-kota. Kelompok-kelompok kecil ini muncul secara spontan tanpa strategi bersama, bekerja sendiri-sendiri, dan masing-masing membangun kontak dengan komandan-komandan Falintil di hutan.¹⁷¹

147. Kelompok-kelompok bawahanah ini semakin penting setelah hancurnya *zonas libertadas*. Radio komunikasi dua-arah antara satuan-satuan gerilya, yang hancur waktu itu, digantikan dengan komunikasi melalui kurir. Pihak pemimpin gerilya di hutan membangun jaringan bawahanah dengan membentuk berbagai organisasi seperti Komite Demokratis Revolusioner (Comité Democrático Revolucionária, CDR) dan Milisi Rakyat untuk Pembebasan Nasional (Milicia Popular de Libertação Nacional, Miplin).¹⁷² Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan suatu basis dukungan baru bagi resistansi bersenjata, setelah Falintil harus berperang tanpa basis dukungan logistik di hutan. Jaringan ini meluas beberapa tahun sesudah hancurnya *zonas libertadas* dan bisa mendukung perjuangan bersenjata Falintil tanpa satu pangkalan tetap di hutan. Karena itu, para pemimpin Resistansi bisa mengatakan bahwa sekarang *bases de apoio* telah berpindah ke tempat-tempat permukiman penduduk di desa dan kota yang dikuasai tentara Indonesia.¹⁷³

148. Pemimpin Falintil di gunung berusaha mengarahkan perjuangan bawahanah dengan membentuk Miplin. Berbeda dengan kebanyakan kelompok bawahanah, Miplin diorganisasikan mengikuti struktur militer. Orang sipil yang tergabung diorganisasikan dalam regu dan peleton. Taur Matan Ruak, seorang komandan operasional Falintil antara 1982 dan 1984, menjelaskan peran Miplin kepada Komisi:

Misi mereka normalnya menyampaikan sesuatu [informasi] tentang mata-mata yang ada di sekeliling, jangan-jangan mereka mencelakakan, tentang gerak [tentara] Indonesia ke mana. Normalnya itu yang disebut milisi. Tetapi tidak memegang senjata karena senjata tidak ada...

Miplin itu konsep yang kita buat yang kalau kita bandingkan dengan konsep klasik orang asing, sulit sekali. Kadang-kadang orang-orang asing terkejut karena mereka membandingkannya dengan konsep klasik mereka...[tertawa]...Milisi klasik mereka itu diberi senjata, diberi pelatihan untuk menggunakan senjata. Kita tidak punya senjata, hanya menyuruh mereka untuk memotivasi penduduk melakukan kewaspadaan.¹⁷⁴

149. Walaupun ada usaha dari pemimpin Resistansi untuk memformalkan struktur perjuangan bawahanah, banyak kelompok yang masih beroperasi sendiri-sendiri. Kelompok-kelompok dibentuk oleh para mantan kader politik atau gerilyawan.

* Mereka ini pada awalnya disebut 'ligação' (penghubung) atau 'vias de canais' (saluran) dan setelah pertengahan 1980-an lebih dikenal dengan sebutan 'estafeta' (penyampai). [Wawancara CAVR dengan Vasco da Gama [Criado], Dili, 18 Mei 2004.]

Awalnya mereka hanya bertukar informasi tentang perkembangan keadaan. Tetapi kemudian mereka mulai mencari hubungan dengan gerilyawan Falintil di hutan dan mengumpulkan bahan makanan, obat-obatan, dan pakaian untuk disampaikan kepada para gerilyawan. Kelompok-kelompok ini beroperasi dalam sel-sel yang terdiri tiga sampai lima orang, yang dikenal dengan sebutan *núcleos*. Orang-orang dalam *núcleos* berhubungan dengan gerilyawan dan kadang-kadang berhubungan dengan *núcleos* lain. Sebagian kelompok berorganisasi dalam jaringan yang dikendalikan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh pemimpin Resistansi di hutan. Kelompok-kelompok bawahan yang lain beroperasi independen tetapi punya hubungan langsung dengan komandan Falintil.¹⁷⁵

150. Pada 1986 CRRN berusaha meningkatkan efektivitas jaringan bawahan dengan menempatkannya di bawah koordinasi suatu badan bernama Organisasi Koordinasi Antar-Wilayah (Organização Coordenadora Inter-Regional, OCR).^{*} OCR adalah organ regional dari CRRN yang bekerja di kalangan penduduk sipil. Organ ini bertahan sampai sekitar 1988. Meskipun para penanggungjawabnya bekerja keras di seluruh wilayah negeri untuk membangun jaringan, tidak semua kelompok bisa ditempatkan di bawah OCR, karena jumlah kelompok bawahan yang semakin banyak maupun karena keberadaan tentara Indonesia dengan jaringan intelijennya yang sangat luas membatasi kemampuan operasinya.

151. Satu perkembangan penting dalam gerakan resistansi bawahan terjadi ketika di kota terbentuk sel-sel di kalangan pelajar sekolah-sekolah menengah. Sel-sel ini berhasil menyusup dan menguasai organisasi-organisasi legal seperti organisasi kependuan Katolik Escuteiros dan Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS), organisasi pelajar yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Misalnya, para anggota satu *nucleo* bernama “007” di Dili, seperti Constâncio Pinto dan José Manuel Fernandes, adalah pemimpin-pemimpin dari Escuteiros.¹⁷⁶ Ricardo Ribeiro, seorang aktivis bawahan Sagrada Família yang pada 1988 menjadi penghubung gerakan bawahan dengan Falintil di wilayah timur juga menjadi salah seorang pengurus OSIS dan kemudian menjadi ketua di sekolahnya, SMA Hati Kudus, Dili.¹⁷⁷

152. Dengan didirikannya Universitas Timor Timur (UNTIM) oleh sejumlah pejabat pemerintah pendudukan Indonesia pada 1986, mahasiswa menjadi sasaran kegiatan pengorganisasian gerakan bawahan. Pada awal 1991 anggota-anggota beberapa sel bawahan, termasuk yang sebelumnya berpangkalan secara rahasia di sekolah Externato de São José mendirikan organisasi HPPMAI (Himpunan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Anti-Integrasi) yang terutama bekerja di kalangan mahasiswa.[†]

* Menurut Vasco da Gama, orang-orang yang aktif dalam badan ini antara lain adalah Aitahan Matak dan Paulo Assis Belo. [Wawancara CAVR dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.]

† Ketua dari organisasi ini adalah Agosto Gama (yang berasal dari satu sel bawahan di Externato dan saat itu sudah menjadi anggota Comité Ejecutivo) dan wakil ketua adalah Vasco da Gama, yang sebelumnya aktif di satu sel bawahan bernama Raculima. [Wawancara CAVR dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.]

153. Perkembangan yang sejajar juga terjadi di luar Timor-Leste pada awal 1980-an ketika pemerintah Indonesia mulai mengirim orang Timor-Leste untuk mengikuti pendidikan di universitas-universitas di kota-kota di Jawa, Bali dan bagian-bagian lain Indonesia. Di antara mereka terdapat orang-orang yang di masa *zonas libertadas* sudah aktif dalam berbagai kegiatan Fretilin. Di Indonesia mereka ini aktif dalam organisasi mahasiswa bernama Ikatan Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar Timor Timur (IMPPETTU) yang didirikan oleh militer dan pemerintah Indonesia untuk tujuan mengontrol mereka. Mahasiswa-mahasiswa yang aktif berhasil menggunakan organisasi ini untuk keperluan membantu perjuangan yang masih berlangsung di Timor-Leste. Pada 1988 di Bali dibentuk Resistansi Nasional Mahasiswa Timor-Leste (Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste, Renetil) dan dua tahun selanjutnya memperluas jaringan ke Jawa dan pulau-pulau lain. Pada sekitar waktu yang sama dibentuk Komisi Rahasia Resistansi Nasional Pelajar/Mahasiswa Timor-Leste (Comissão Secreto da Resistência Nacional dos Estudantes Timorenses, CSRNET). Selanjutnya di antara pelajar yang meneruskan pendidikan ke Bali dan Jawa terdapat aktivis Organisasi Pemuda dan Pelajar Katolik Timor-Leste (Organização de Juventude e Estudante Católica de Timor-Leste, OBJECTIL) dan kelompok lain yang juga mengorganisasi kelompok bawahan di tempat masing-masing, seperti Front Pelajar/Mahasiswa Bawah-tanah Timor-Leste (Frente Estudantil Clandestina de Timor-Leste, FECLETIL).¹⁷⁸

154. Dalam kurun waktu itu di Timor-Leste berkembang demonstrasi dan bentuk-bentuk resistansi sipil lain sebagai tindakan politik untuk melawan pendudukan Indonesia terhadap Timor-Leste. Ini meliputi pengibaran bendera nasional Republik Demokratik Timor-Leste, menulis dinding-dinding secara rahasia dengan seruan-seruan menentang pendudukan dan mendukung kemerdekaan, penempelan dan penyebaran selebaran dengan isi yang sama. Di Indonesia, selain demonstrasi, para mahasiswa juga melompati pagar kedutaan besar asing di Jakarta untuk meminta suaka politik dan untuk menarik perhatian internasional.

155. Dengan semakin banyaknya kelompok dan kegiatan politik, serta kebutuhan melakukan persiapan untuk menyambut kunjungan delegasi parlemen Portugis pada 1991, pemimpin Resistansi berusaha mengoordinasikan semua kelompok bawahan yang beroperasi di Timor-Leste. Untuk itulah pada Juni 1990 Penasihat Politik CNRM José da Costa (Mau Hudu Ran Kadalak) mengadakan pertemuan di Baucau dengan sejumlah pemimpin gerakan bawahan. Sebagai hasil pertemuan ini, sejumlah pemimpin dari berbagai kelompok bawahan membentuk Komite Eksekutif CNRM dalam Front Bawahan (Comité Executivo da CNRM na Frente Clandestina, yang lebih sering disebut Comité

.....
* Misalnya João Freitas da Câmara, seorang asisten politik di Bobonaro pada masa *zonas libertadas*, setelah ditangkap oleh tentara Indonesia, ia kemudian bekerja pada pemerintah kecamatan Same dan selanjutnya berhasil mendapatkan beasiswa untuk belajar di Universitas Atmajaya, Jakarta pada 1981. Ia kemudian bergerak di bawahan mendukung resistansi di Indonesia sampai akhirnya ditangkap, ditahan, dan dipenjarakan karena mengorganisasikan demonstrasi pertama yang diadakan di Jakarta pada 19 November 1991 untuk memprotes Pembantaian Santa Cruz seminggu sebelumnya. [Wawancara CAVR dengan João Freitas da Câmara, Dili, 5 Juni 2004.]

Executivo atau disingkat CE) di Dili. Badan ini menjadi organ resmi dari CNRM untuk mengoordinasikan semua kelompok bawah.* Constância Pinto, yang waktu itu bekerja sebagai guru dan aktif dalam kelompok bawahanah Orgão 8, dipilih sebagai Sekretaris Komite Eksekutif, dengan Donaciano Gomes sebagai Wakil Sekretaris I dan José Manuel Fernandes sebagai Wakil Sekretaris II.¹⁷⁹ António Tomás Amaral da Costa (“Aitahan Matak”) kemudian dimasukkan pada kepengurusan ini sebagai Sekretaris III.†

156. Keputusan untuk membentuk Comité Executivo juga berkaitan dengan strategi baru yang dijalankan CNRM.¹⁸⁰ Strategi ini, yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan melalui jalur diplomatik, bukan perjuangan bersenjata, mengharuskan Resistansi memperoleh perhatian internasional. Ketika aksi-aksi politik seperti memasuki kedutaan besar negara-negara asing mendapatkan perhatian internasional, pemimpin Resistansi mulai melihat bahwa gabungan dari kegiatan bawahanah dan aksi resistansi sipil bisa mencapai tujuan itu. Avelino Coelho, salah seorang aktivis gerakan bawahanah di Indonesia pada waktu itu, mengemukakan kepada Komisi:

...setelah kita [melakukan aksi meminta] suaka, setelah demonstrasi di Tasi Tolu, ada aksi yang saling menyambung. Mahasiswa minta suaka [di Kedutaan] Vatikan dan Jepang, kemudian [Sri Paus] Yohanes [Paulus II] mengunjungi [Dili], [terjadi] demonstrasi, 12...Oktober di Tasi Tolu. Maka kawan Xanana juga mengubah strategi di sana pada waktu itu, bahwa gerakan pemuda sebagai kekuatan mahadahsyat untuk memukul. Jadi waktu itu orientasinya gerilya ada, tapi tidak aktif dalam arti militer, lebih aktif dalam arti politik, sebagai sumber inspirasi untuk perjuangan, tetapi tidak menggunakan Falintil sebagai gerakan militer karena kekurangan amunisi dan lain sebagainya dan juga untuk melindungi gerakan itu sendiri. Maka strategi Resistansi mulai berubah, mulai melirik gerakan pemuda setelah tahun 1989 suaka dan demonstrasi. Dalam periode ini...inisiatif-inisiatif mahasiswa merubah [sic] konsep berpikir kawan Xanana sendiri, bagaimana memimpin gerakan itu.¹⁸¹

157. Comité Executivo berada langsung di bawah Xanana Gusmão, Ketua CNRM dan Panglima Falintil. Tugas Comité Executivo adalah memantau, mengarahkan, dan mengoordinasikan semua kegiatan gerakan bawahanah.¹⁸² Di dalamnya ada beberapa seksi, antara lain Seksi Pemuda dan Penggerak Masa, Agitasi dan

.....
* Menurut Constância Pinto, komite ini ditempatkan di bawah CNRM karena dengan semakin bertambahnya orang UDT dan APODETI serta anak-anak mereka yang bergabung dalam perjuangan bawahanah dikhawatirkan penempatan komite ini di bawah Fretilin akan memecah-belah. [Pinto dan Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle*, hal. 123.]

† Avelino Coelho Silva, salah seorang pendiri OJECTIL, mengatakan bahwa Aitahan Matak dimasukkan dalam jajaran kepemimpinan Comité Executivo oleh Mau Hudu setelah melakukan protes. [Wawancara CAVR dengan Avelino Coelho Silva, Dili, 17 Juli 2004; lihat pula Wawancara CAVR dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.]

Propaganda, Seksi Studi dan Analisis, Seksi Informasi dan Keamanan, dan Seksi Dana. Meskipun pembentukan Comité Executivo berdasarkan pengarahan dari pemimpin CNRM, tidak berarti semua kelompok dan organisasi bawahan berada di bawah wewenangnya. Sejumlah organisasi yang bergerak di Indonesia bekerja cukup erat dengan komite ini, tetapi tetap beroperasi secara independen. Demikian pula di dalam Timor-Leste, banyak kelompok bawahan mempertahankan hubungan masing-masing dengan komandan-komandan Falintil di hutan.* Gregório Saldanha, yang dalam Comité Executivo bertanggung jawab atas Seksi Pemuda dan Penggerak Massa, menyampaikan kepada Komisi satu kejadian yang memberikan gambaran mengenai masalah ini:

Kadang-kadang ada kebandelan. Misalnya Constâncio Pinto membawa surat ke Motael untuk Julião Maussiri berhubungan dengan kedatangan DPP [Delegasi Parlemen Portugis]. Constâncio bilang, "Ini ada surat perintah dari Xanana."

Waktu itu dia [Maussiri] bilang, "Saya tidak mau perintah itu lewat orang lain kecuali dari Xanana langsung." Dia minta kepada Constâncio, "Mana surat perintahnya?" Jadi secara formal dia tidak mau terima karena dia tidak mau mengakui CE [Comité Executivo] itu. Tetapi di luar itu dia menyuruh kurirnya untuk meminta informasi itu."¹⁸³

158. António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak), yang pada waktu itu menjadi salah seorang wakil sekretaris Comité Executivo, mengatakan:

Organisasi seperti 3-3, 5-5, 7-7 itu semua tidak masuk dalam struktur CNRM. Tapi organisasi-organisasi ini berjuang untuk kemerdekaan. OJETIL dan Renetil masuk struktur CNRM.

Semua organisasi yang berada di bawah naungan Orgão 8 [masuk dalam CNRM]. Kadang [ada organisasi-organisasi yang] punya jaringan dengan komandan-komandan tertentu, seperti David Alex, Konis, Venancio Ferraz, Merak, dan lain-lain. Jaringan itu bersifat partikular, tidak melalui Orgão 8."¹⁸⁴

159. Semakin lama peran gerakan bawahan menjadi semakin penting dalam seluruh perjuangan membebaskan Timor-Leste dari pendudukan Indonesia. Falintil yang tidak mendapatkan bantuan logistik maupun persenjataan dari luar negeri sangat mengandalkan para aktivis bawahan untuk mendapatkan bahan makanan,

* Misalnya organisasi pemuda Fitun, yang dibentuk sesudah terbentuknya Comité Executivo, bergerak independen dan membangun hubungan langsung dengan Ketua CNRM/Panglima Falintil Xanana Gusmão. [Wawancara CAVR dengan salah seorang pendiri Fitun, Armando José Dourado da Silva, Dili, 10 Juni 2004.] Gregório Saldanha mengakui bahwa Comité Executivo "tidak bisa mengontrol" semua kelompok bawahan karena jumlahnya yang sangat banyak dan adanya orang-orang yang "tidak mengaku dirinya berjuang." [Wawancara CAVR dengan Gregório Saldanha, Dili, 5 Juni 2004.]

amunisi, informasi, dan dukungan penduduk setempat. Kelangsungan hidup Falintil sesungguhnya bergantung pada gerakan resistansi bawahan. Pemimpin Falintil juga mengandalkan gerakan bawahan untuk membawa informasi ke luar negeri kepada para aktivis di luar negeri yang bertugas dalam Front Perjuangan Diplomatik, yang tanpa informasi dari dalam negeri itu akan sulit meyakinkan dunia internasional untuk tetap memperhatikan persoalan Timor-Leste.

160. Meskipun perannya sangat penting, dalam struktur awal CNRM tidak disebutkan tentang gerakan ini. Dokumen RER “Reajustamento Estrutural da Resistência e Proposta da Paz” dari pemimpin CNRM hanya menyebutkan keberadaan dua organ dalam CNRM, yaitu Komando Falintil dan DRSE. Ini agaknya merupakan petunjuk bahwa gerakan ini berada di bawah Komando Falintil sebagai semacam saluran penghubung antara Falintil dengan basis dukungan dalam negeri di satu sisi dan dengan Front Perjuangan Diplomatik di sisi lain, untuk mendukung perjuangan bersenjata.

161. Comité Executivo mengalami kesulitan besar ketika sejumlah pemimpinnya terpaksa harus bersembunyi akibat diburu aparat keamanan Indonesia setelah terjadinya insiden SMP Paulus VI, Dili, pada Oktober 1990. Salah seorang pemimpinnya bahkan sampai melarikan diri ke hutan untuk tinggal bersama Falintil.¹⁸⁵ Kesulitan ini kemudian bisa diatasi dengan memasukkan orang-orang yang juga telah lama berpengalaman dalam kegiatan bawahan. Seorang aktivis bawahan yang bergabung dalam Comité Executivo mengisahkan:

Waktu terjadi pengejaran pada kejadian Paulus, mereka ini lolos, termasuk saya juga. Tetapi saya ini sembunyi, muncul lagi. Ada teman-teman yang lain sembunyi sampai Indonesia keluar [dari Timor-Leste] baru keluar, ada juga yang lari ke luar negeri. Ada juga yang sembunyi, pada saat kondisi sudah membaik keluar lagi untuk melakukan kegiatan. Pada saat itu Constâncio Pinto, kita tetap kerja. José Manuel [Fernandes] lari ke hutan. Adano [Donaciano Gomes] ke luar negeri. Jadi program-program Comité Executivo itu macet. Saya bersembunyi di Balibar [Dili], setelah kondisi membaik saya turun lagi. Kemudian saya kontak lagi dengan Constâncio Pinto dan teman-teman yang lain seperti Juvencio Martins, Jacinto Alves, Francisco Branco, Filomeno da Silva. Kemudian kita memulai lagi Comité Executivo itu dan mengaktifkan kembali sampai puncaknya itu kita ditangkap kembali pada 12 November 1991 itu.¹⁸⁶

162. Pukulan terberat dialami oleh Comité Executivo setelah insiden Pembantaian Santa Cruz 12 November 1991. Sejumlah penanggungjawabnya, seperti Filomeno da Silva, Francisco Branco, Jacinto Alves, Juvencio Martins, dan Gregório Saldanha ditangkap dan selanjutnya ditahan, diadili, dan dihukum penjara dalam waktu yang lama. Penanggungjawab utama Comité Executivo, Constâncio Pinto, berhasil lolos dari penangkapan dan selanjutnya melarikan diri ke luar negeri. Pukulan selanjutnya yang dialami adalah penangkapan Ketua CNRM/Panglima Falintil Xanana Gusmão pada November 1992 di kota Dili.¹⁸⁷

163. Untuk memulihkan hubungan dengan gerakan bawahan dan mengembalikan kontrol atas kegiatan-kegiatannya, pada sekitar 1993 CNRM yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Konis Santana, membentuk Komite Eksekutif Perjuangan/ Front Bawahan (Comité Ejecutivo da Luta/Frente Clandestina, CEL/FC). CEL/FC dibentuk sebagai salah satu sayap CNRM dengan tugas khusus mengoordinasikan gerakan bawahan. Komite Eksekutif Perjuangan/Front Bersenjata (Comité Ejecutivo da Luta/Frente Armada (CEL/FA) dibentuk pada waktu yang sama untuk melancarkan perjuangan bersenjata di hutan.¹⁸⁸ Dengan pembentukan CEL/FC ini, kedudukan gerakan resistansi bawahan dalam struktur CNRM menjadi semakin kuat. Mungkin pada masa ini tiga bentuk perjuangan, yaitu perjuangan bersenjata di hutan, perjuangan bawahan orang sipil di desa dan di kota, dan perjuangan diplomatik di arena internasional “diresmikan” sebutannya masing-masing menjadi ‘Frente Armada’ (Front Perjuangan Bersenjata), ‘Frente Clandestina’ (Front Perjuangan Bawah-tanah) dan ‘Frente Diplomática’ (Front Perjuangan Diplomatik) meskipun kepemimpinan Falintil tetap yang menonjol. Tentang kepemimpinan Falintil, penanggungjawab tertinggi terakhir Frente Clandestina, Francisco Guterres “Lú-Olo” mengatakan kepada Komisi:

Semua kelompok agar bisa mengontrol kerja clandestina berhubungan dengan Frente Armada. Tetapi Frente Armada juga membentuk clandestina sendiri. Praktik struktur Frente Clandestina berfungsi di Dili, tetapi siapa yang mengorganisasi clandestina, lebih banyak Frente Armada yang mengorganisasi. Oleh karena itu Frente Clandestina di sini [Dili] harus berkoordinasi dengan kami [Frente Armada], supaya bisa mengembangkan terus kegiatan mengorganisasi clandestina dengan pemimpin ini, pemimpin itu...¹⁸⁹

164. Setelah penangkapan Xanana Gusmão, diusulkan agar kepemimpinan digantikan oleh suatu “troika” yang terdiri atas pemimpin resistansi bersenjata, pemimpin resistansi bawahan, dan pemimpin resistansi diplomatik. Kepala staf CNRM Konis Santana menolak gagasan ini. Xanana Gusmão tetap menjadi pemimpin tertinggi Resistansi dengan tetap menempati kedudukan Panglima Falintil dan Ketua CNRM meskipun sedang menjalani hukuman penjara 20 tahun di Jakarta. Tetapi, menurut Agio Pereira, operasi sehari-hari berada dalam pengarahannya Taur Matan Ruak, Konis Santana, dan José Ramos-Horta yang masing-masing bertanggung jawab atas perjuangan bersenjata, perjuangan bawahan, dan perjuangan diplomatik.¹⁹⁰

165. CEL/FC dipimpin oleh Keri Laran Sabalae (Pedro Nunes) sebagai Sekretaris dan David Dias Ximenes sebagai Wakil Sekretaris. Mereka dibantu oleh tiga orang *adjuntos*, yaitu Paulo Alves (Tubir Loke Dalan), Paulo Assis Belo (Funu Matak), dan Virgilio Simith (Kranek).¹⁹¹ Para *adjuntos* bertugas mereorganisasikan gerakan bawahan di seluruh negeri. CEL/FC membentuk Organ Pengarah Regional (Orgão Directiva Regional, ODIR) yang bertanggung jawab atas pengorganisasian gerakan bawahan di beberapa distrik. Di seluruh Timor-Leste ada tiga ODIR: region timur (Paulo Assis), region tengah (Paulo Alves),

dan region barat (Aquilino Fraga Guterres, Ete Uco). Menurut teorinya, masing-masing ODIR membawahi satu struktur yang terdiri atas Komite Eksekutif Zona (Comité Executivo da Zona, Cezo) beroperasi pada tingkat subdistrik; Inti Resistansi Rakyat (Nucleo da Resistência Popular, Nurep) yang beroperasi pada tingkat desa; dan Sel Masyarakat (Celula de Comunidade), Celcom, pada tingkat *aldeia*. Struktur tersebut tidak merata di seluruh negeri.¹⁹²

166. Dengan hilangnya Sabalae pada 1 Juni 1995, Konis Santana yang saat itu memimpin CNRM di dalam negeri, mengambil alih kepemimpinan Frente Clandestina.¹⁹³ Dengan pembentukan CNRT menggantikan CNRM pada April 1998, CEL/FC digantikan oleh Front Politik Dalam Negeri (Frente Política Interna, FPI).¹⁹⁴ Konis Santana tetap memimpin gerakan bawahan sampai kematiannya pada 11 Maret 1998 karena sakit. Francisco Guterres “Lú-Olo,” yang sebelum kematian Konis Santana menjadi Wakil Sekretaris Comissão Directiva da Fretilin (organ tertinggi Fretilin di dalam negeri), menjadi pemimpin FPI dengan sebutan Sekretaris, dengan David Dias Ximenes tetap menjadi Wakil Sekretaris.¹⁹⁵

167. Pembentukan CNRT disusul dengan perubahan besar pengorganisasian gerakan bawahan. Gerakan diubah strukturnya mengikuti struktur empat region Falintil, dengan satu region tambahan, Região Autonomica Dili, yang meliputi wilayah ibukota. Kepengurusan CNRT di masing-masing region dibentuk dari para pemimpin Frente Clandestina dan Frente Armada. Menurut para kader bawahan, kepengurusan CNRT merupakan “penyatuan” dari struktur Frente Clandestina dan Frente Armada.¹⁹⁶

168. Pemimpin tertinggi di masing-masing *região* adalah seorang sekretaris dan seorang wakil sekretaris. * Sekretaris *Região* 1 adalah Renan Selac, sekretaris *Região* 2 adalah Sabika Bessi Kulit (yang juga menjabat Komandan Falintil untuk region yang bersangkutan) dengan wakil sekretaris Marito Reis. Sekretaris *Região* 3 adalah Falur Rate Laek (yang juga komandan untuk region yang bersangkutan) dengan wakil sekretaris Virgilio Simith (Kranek). Sekretaris *Região* 4 adalah Riak Leman dengan wakil sekretaris Aquilino Fraga Guterres (Ete Uco). Sekretaris *Região* Autonom Dili adalah José da Silva .¹⁹⁷

169. Organ-organ gerakan bawahan dari tingkat subdistrik sampai *aldeia* menjadi organ-organ CNRT, tetapi dengan menyandang namanya yang lama (Cezo, Nurep, dan Celcom). Di atasnya dibentuk struktur baru untuk beroperasi pada tingkat distrik (sub-*região*).

170. Tidak lama setelah pembentukan CNRT, Presiden Soeharto jatuh dari kekuasaannya dan Indonesia menjalani proses demokratisasi. Ini memberi ruang gerak yang besar bagi para aktivis gerakan bawahan. Ruang semakin terbuka ketika Presiden Indonesia yang baru, B.J. Habibie pada Juni 1998 menawarkan “otonomi luas” kepada Timor-Leste. Pada 1999 Presiden Habibie melangkah

* Marito Reis, wakil sekretaris *Região* 2, mengatakan bahwa ketika menyusun organisasi CNRT ada ketentuan bahwa sekretaris harus dijabat oleh komandan militer sedang wakil sekretaris oleh “aktivis politik yang tinggal di kota.” [Wawancara CAVR dengan Marito Reis, Baucau, 17 November 2002.]

lebih jauh dengan menawarkan dua pilihan: otonomi luas atau kemerdekaan. Meskipun pada 1998 satuan-satuan bersenjata dukungan TNI/ABRI mulai dibentuk untuk menyebar teror terhadap para aktivis kemerdekaan, ini tidak menggentarkan para aktivis bawahanah dalam menjalankan kegiatan mereka. Organ-organ bawahanah dari tingkat aldeia hingga region semakin meningkatkan kegiatan dan rakyat semakin berani menuntut kemerdekaan. Dengan kedatangan UNAMET untuk menyelenggarakan Jajak Pendapat, kegiatan CNRT dipusatkan pada mempersiapkan rakyat untuk memilih kemerdekaan dalam pemungutan suara 30 Agustus 1999. Dengan tercapainya kemerdekaan melalui pemungutan suara tersebut, maka selesailah tugas utama gerakan bawahanah.

Catatan akhir

1. Wawancara CAVR dengan Eduardo de Deus Barreto, Gleno (Ermera), 12 Agustus 2003.
2. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
3. Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 23 April 2004; Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004; dan Jacinto Alves, 11 Mei 2004.
4. Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004 dan Adriano João, Dili, 23 April 2004.
5. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 11 Mei 2004; Adriano João, Dili, 23 April 2004; dan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004. Lihat pula wawancara CAVR dengan Francisco Gonçalves, Dili, 14 Juni 2003.
6. Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 23 April 2004.
7. Wawancara CAVR dengan Julio Maria de Jesus (aktivis UNETIM di Ponta Leste), 29 Mei 2004; Filomeno Paixão de Jesus, Dili, 17 Juni 2004; Tomás Araújo, 14 Oktober 2003; Agostino Carvaleira Soares, Cailaco (Bobonaro), 14 Juni 2003; lihat juga Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin, Submisi kepada CAVR, CD No. 18.
8. Wawancara CAVR dengan Agostinho Carvaleira Soares (mantan komandan kompi di Fronteira Norte), Cailaco (Bobonaro), 14 Juni 2003.
9. Wawancara CAVR dengan Filomeno Paixão de Jesus, Dili, 17 Juni 2004.
10. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves (yang setelah 1977 menjadi seorang anggota Staf Umum Falintil), Dili, 11 Mei 2004. Lihat pula wawancara CAVR dengan Filomeno Paixão de Jesus, Dili, 17 Juni 2004; Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004; Taur Matan Ruak, Dili, 9 Juni 2004.
11. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
12. Wawancara CAVR dengan Sebastião da Silva ("Mendeo"), Ossu (Viqueque), Juni 2003; Agostinho Carvaleira Soares, Cailaco (Bobonaro), 14 Juni 2003; Eduardo de Deus Barreto, Gleno (Ermera), 12 Agustus 2003.
13. Wawancara CAVR dengan Filomeno Paixão de Jesus, Dili, 17 Juni 2004.
14. Wawancara CAVR dengan Filomeno Paixão de Jesus, Dili, 17 Juni 2004.
15. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 11 Mei 2004.
16. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 11 Mei 2004.
17. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
18. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
19. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004; Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004; dan Filomeno Paixão de Jesus, Dili, 17 Juni 2004.
20. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.

21. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 11 Mei 2004; Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004; António da Silva, Ossu (Viqueque), 10 Juni 2003; José Francisco Silva, 12 Januari 2004; Fausto do Carmo Mendonça, Remexio (Aileu), 16 Oktober 2003; Fernando Amaral, Lospalos (Lautém), 28 Mei 2003.
22. Wawancara CAVR dengan Eduardo de Deus Barreto, Gleno (Ermera), 12 Agustus 2003.
23. Wawancara CAVR dengan Umbelina Pires, Manumera (Turiscai, Manufahi) (tanpa tanggal).
24. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 11 Mei 2004; António Amado de Jesus Ramos Guterres, Manatuto, 11 Desember 2003; Office for Promotion of Equality, Prime Minister's Office, Democratic Republic of Timor-Leste, *Written with Blood*, Dili, 2004, hal. 18-19.
25. Wawancara CAVR dengan Virgilio da Silva Guterres, Dili, 25 Mei 2004.
26. Wawancara CAVR dengan Eduardo de Deus Barreto, Gleno (Ermera), 12 Agustus 2003; Fausto do Carmo Mendonça, Dili, 16 Oktober 2003; Caetano de Sousa Guterres, Dili, 22 Mei 2004.
27. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
28. Wawancara CAVR dengan Virgilio da Silva Guterres, Dili, 25 Mei 2004.
29. Office for Promotion of Equality, *Written with Blood*, hal. 19.
30. Office for Promotion of Equality, *Written with Blood*, hal. 23 menyebutkan kegiatan ini di Zona Modok, Sektor Centro Norte.
31. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004; Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004; lihat pula Office for Promotion of Equality, *Written with Blood*, hal. 20.
32. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
33. Wawancara CAVR dengan José Francisco Silva, 12 Januari 2004; Taur Matan Ruak, Dili, 9 Juni 2004; Fausto Carmo Mendonça, Remexio (Aileu), 16 Oktober 2003.
34. Wawancara CAVR dengan Virgilio da Silva Guterres, Dili, 25 Mei 2004.
35. Office for Promotion of Equality, *Written with Blood*, hal. 23.
36. Wawancara CAVR dengan Virgilio da Silva Guterres, Dili, 25 Mei 2004.
37. "Timorese Women 'Are Fighting on All Fronts'", *East Timor News*, No. 14, 25 August 1977. Tulisan ini disusun oleh Sekretaris OPMT pertama, Rosa Bonaparte "Muki" dan diterjemahkan dengan sedikit diringkas oleh redaktur *East Timor News*.
38. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 11 Mei 2004; lihat pula Office for Promotion of Equality, *Written with Blood*, hal. 18-19.
39. Office for Promotion of Equality, *Written with Blood*, hal. 21.
40. Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004.
41. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Agustus 2004.
42. Wawancara CAVR dengan Gaspar Seixas, Iliomar (Lautém), 29 Mei 2003 dan Jacinto Alves, Dili, 5 Agustus 2004.
43. Wawancara CAVR dengan Eduardo de Deus Barreto, Gleno (Ermera), 12 Agustus 2003.
44. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
45. Wawancara CAVR dengan António Amado de Jesus Ramos Guterres, Manatuto, 11 Desember 2003.
46. Wawancara CAVR dengan António da Silva dan Raquel da Silva, Ossu (Viqueque), 10 Juni 2003; dan wawancara CAVR dengan Bernardo Quintão, Viqueque, 4 Juni 2003.
47. Wawancara CAVR dengan Alexandrino de Jesus, Hatolia (Ermera), 20 Oktober 2003.
48. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Agustus 2004. Terjadinya penyiksaan juga dikemukakan oleh Francisco Gonçalves. Wawancara CAVR dengan Francisco Gonçalves, Dili, 14 Juni 2003; António da Silva dan Raquel da Silva, Ossu (Viqueque), 10 Juni 2003; Domingos Maria Alves, Aileu, 15 Oktober 2003; Filomeno Paixão de Jesus, Dili, 17 Juni 2004; António Amado de Jesus Ramos Guterres, Manatuto, 11 Desember 2003; dan Xanana Gusmão, 7 Juli 2004.
49. Wawancara CAVR dengan Eduardo de Deus Barreto, Gleno (Ermera), 12 Agustus 2003.
50. Wawancara CAVR dengan Egas da Costa, Dili, 19 Mei 2004.
51. Wawancara CAVR dengan António da Silva, Jakarta, 11 Agustus 2004.
52. Dokumen Departamento da Orientação Política e Ideológica (DOPI) Komite Sentral Fretilin berjudul, "The National Liberation Movement, Imperialism and the Puppet Parties," disahkan pada sidang Dewan Tertinggi Perjuangan, Laline (Lacluta, Viqueque), 20 Mei 1977. Dokumen ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dipublikasikan dengan judul "National Independence is not Only a Flag and an Anthem," dalam *East Timor News*, No. 36, 29 Juni 1978.

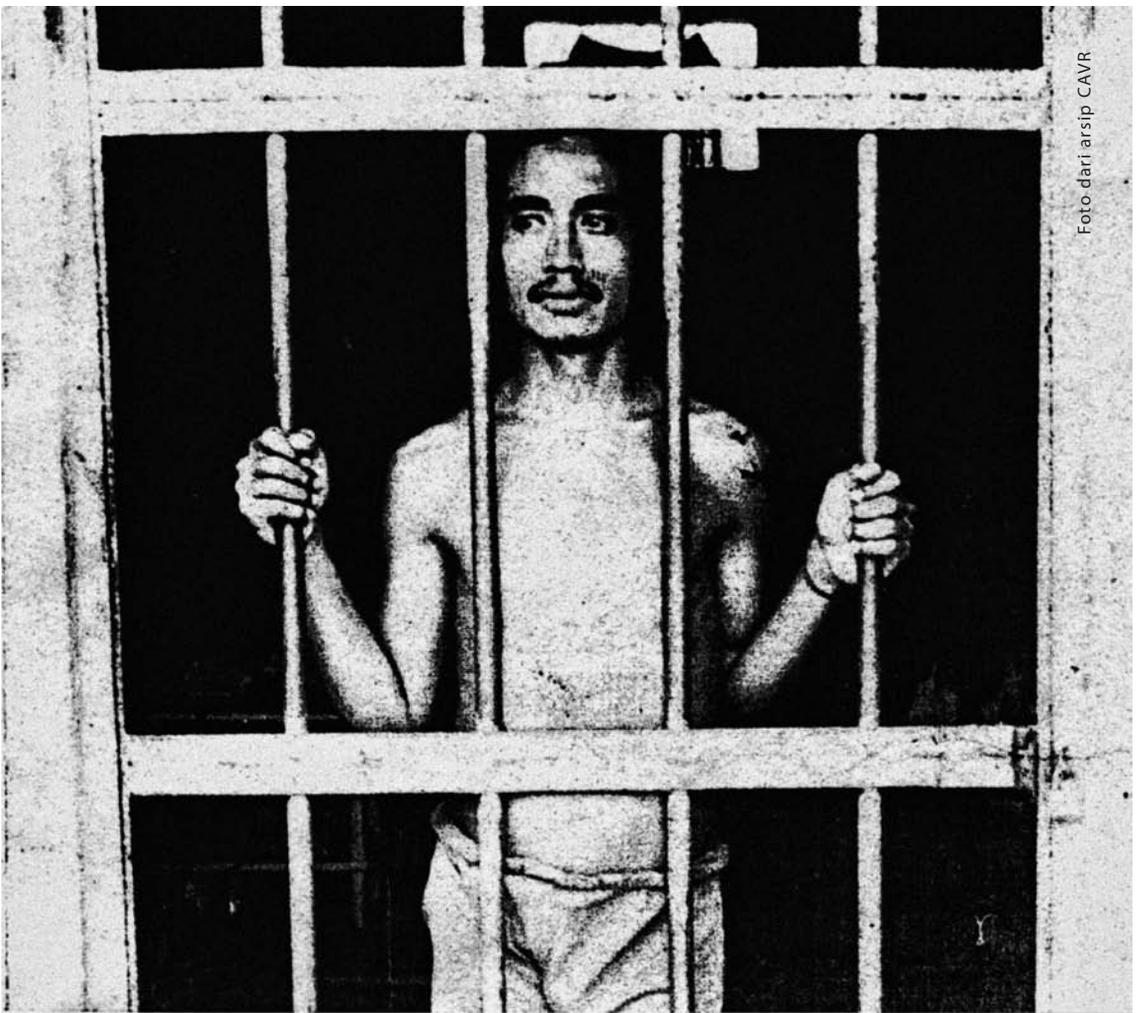
53. Fretilin, Manual e Programa Política Fretilin, 1974, butir 3.
54. "Timorese Women 'Are Fighting on All Fronts,'" *East Timor News*, No. 14, 25 Agustus 1977.
55. "Timorese Women 'Are Fighting on All Fronts,'" *East Timor News*, No. 14, 25 Agustus 1977.
56. *Manual e Programa Políticos Fretilin*, bagian Manual Políticos, butir 6.
57. *Manual e Programa Políticos Fretilin*, bagian Manual Políticos, butir 9.
58. *Manual e Programa Políticos Fretilin*, bagian Manual Políticos, butir 10.
59. Helen Mary Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*, Yayasan HAK dan Sahe Institute for Liberation, Dili, 2000, hal. 104 dan 107.
60. *Manual e Programa Políticos Fretilin*, bagian Manual Políticos, butir 11 dan 12.
61. Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*, hal. 131-132, 138.
62. *Manual e Programa Políticos Fretilin*, bagian Manual Políticos, butir 13.
63. Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*, hal 95.
64. Mari Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003; wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004.
65. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004 dan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004; Jill Joliffe, *East Timor: Nationalism & Colonialism*, St. Lucia, Queensland, University of Queensland Press, 1978, hal. 90.
66. Lihat kesaksian Mário Carrascalão, João Carrascalão, dan Francisco Xavier do Amaral pada Audiensi Publik CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003. Lihat pula Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*, hal. 126.
67. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004.
68. Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004; Taur Matan Ruak, Dili, 9 Juni 2004; Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
69. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004; Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004; Filomeno Paixão de Jesus, Dili, 17 Juni 2004; Taur Matan Ruak, Dili, 9 Juni 2004; dan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
70. Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004.
71. "National Independence is not only a Flag and an Anthem," *East Timor News*, No. 36, 29 Juni 1978, hal. 2.
72. Wawancara CAVR dengan Marito Reis, Dili, 19 Juni 2003.
73. Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004; Jacinto Alves, Dili, 11 Mei 2004; dan Albino da Costa, Soibada (Manatuto), Juni 2003.
74. Wawancara CAVR dengan Taur Matan Ruak, Dili, 9 Juni 2004.
75. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004 dan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004.
76. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
77. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
78. Wawancara CAVR dengan Filomeno Paixão de Jesus, Dili, 17 Juni 2004 dan Jerónimo Albino, Aifu, Ermera, 10 September 2003.
79. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
80. Wawancara CAVR dengan António da Silva, Jakarta, 11 Agustus 2004.
81. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
82. Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004.
83. Wawancara CAVR dengan António da Silva, Jakarta, 11 Agustus 2004.
84. Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin, Submisi kepada CAVR, CD No. 18.
85. Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin, Submisi kepada CAVR, CD No. 18.
86. Xanana Gusmão, "Autobiography," dalam Xanana Gusmão, *To Resist is To Win! The Autobiography of Xanana Gusmão with Selected Letters and Speeches*, Victoria, Aurora Books, 2000, hal. 50; Ernest Chamberlain, *The Struggle in Iliomar: Resistance in Rural East Timor*, Point Lonsdale, 2003, hal. 16.
87. Xanana Gusmão, "Autobiography," hal. 32; lihat juga wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
88. Xanana Gusmão, "Autobiography," hal. 32-33.
89. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 16 Mei 2005.

90. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, bagian III, Dili, 18 Juni 2004.
91. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004 dan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
92. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
93. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 11 Mei 2004 dan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
94. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
95. Wawancara CAVR dengan Filomeno Paixão de Jesus, Dili, 17 Juni 2004.
96. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004; Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004; dan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
97. Wawancara CAVR dengan Alexandrino de Jesus, Hatolia (Ermera), 20 Oktober 2003; Eduardo de Deus Barreto, Gleno (Ermera), 12 Agustus 2003; Adriano João, Dili, 10 Juni 2003.
98. Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 10 Juni 2004.
99. Wawancara CAVR dengan Adriano Soares Lemos, Hatolia (Ermera), 12 Agustus 2003.
100. Wawancara CAVR dengan Manuel Carceres da Costa, Dili, Juli 2003.
101. Wawancara CAVR dengan Maria José da Costa, Manufahi, Februari 2003.
102. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
103. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
104. Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 10 Juni 2003.
105. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Agustus 2004.
106. Wawancara CAVR dengan Celestino de Carvalho Alves, Fatubessi (Ermera), 6 Oktober 2003; José da Silva Amaral, Uato-Carbau, Viqueque, 18 September 2003; José da Silva, Dili, 18 Maret 2003; Francisco Gonçalves, Dili, 14 Juni 2003; dan Taur Matan Ruak, Dili, 14 Juni 2004.
107. Wawancara CAVR dengan Benvinda G.G. Lopes, Uato-Lari (Viqueque), 16 September 2003.
108. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, bagian III, Dili, 18 Juni 2004.
109. "Memoria Comandante Falintil Ida Kona Ba Nicolau Lobato," *Nacroman*, No. 2/VIII/2002, hal. 3.
110. Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, hal. 20.
111. Wawancara CAVR dengan Eduardo de Deus Barreto, Gleno (Ermera), 12 Agustus 2003.
112. Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin, Submisi kepada CAVR, CD No. 18.
113. "Reajustamento Estrutural da Resistência e Proposta de Paz" (Penyesuaian Struktural Resistansi dan Usulan Perdamaian), dalam Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo, Uma Pátria* (Timor Leste: Satu Bangsa, Satu Tanah Air), Lisbon, Editora Colibri, 1994, hal. 96.
114. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, bagian II, Dili, 10 Agustus 2004.
115. Xanana Gusmão, "Ideological Turnaround" (Perubahan Ideologis) dalam Xanana Gusmão, *To Resist is To Win!*, hal. 133; "Reajustamento Estrutural da Resistência e Proposta de Paz," dalam Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo Uma Pátria*, hal. 96; wawancara CAVR dengan Kay Rala Xanana Gusmão, bagian II, Dili, 10 Agustus 2004.
116. C. Budiardjo dan Liem Sioe Liong, *The War Against East Timor* (Perang terhadap Timor-Leste), Zed Books, London, 1984, hal. 71.
117. Budiardjo dan Liem, *The War against East Timor*, hal. 71.
118. Wawancara CAVR dengan Eduardo de Deus Barreto, Gleno (Ermera), 12 Agustus 2003.
119. Wawancara CAVR dengan Francisco Guterres "Lú-Olo", Dili, 26 Maret 2004.
120. Wawancara CAVR dengan José da Conceição, Dili, 20 Oktober 2004.
121. Wawancara CAVR dengan José da Conceição, Dili, 20 Oktober 2004.
122. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, bagian II, 10 Agustus 2004.
123. Wawancara CAVR dengan Taur Matan Ruak, bagian II, Dili, 14 Juni 2004.
124. Budiardjo dan Liem, *The War against East Timor*, hal. 72-73; Jill Joliffe, *Timor, Terra Sangrenta* (Timor, Tanah Berdarah), Lisboa, O Jornal, 1989, hal. 137.
125. Agio Pereira, "The National Council of Maubere Resistance (CNRM), Overview of the History of the Struggle of East Timor" (Dewan Nasional Resistansi Maubere, Tinjauan tentang Sejarah Timor-Leste), makalah disampaikan pada suatu pertemuan solidaritas, Sydney, Agustus 1994.
126. Pereira, "The National Council of Maubere Resistance (CNRM), Overview of the History of the Struggle of East Timor."
127. Hill, Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae, hal. 161-162.

128. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, bagian II, Dili, 10 Agustus 2004; José da Conceição, Dili, 20 Oktober 2004; dan Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin, Submisi kepada CAVR, CD No. 18. Lihat pula Bagian 3: Sejarah Konflik.
129. Wawancara CAVR dengan Cornelio Gama (L-7), Baucau, 9 April 2003; Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin, Submisi kepada CAVR, CD No. 18.
130. Pereira, "The National Council of Maubere Resistance (CNRM), Overview of the History of the Struggle of East Timor."
131. "Reajustamento Estrutural da Resistência e Proposta de Paz," dalam Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo, Uma Pátria*, hal. 96.
132. Wawancara CAVR dengan Francisco Guterres "Lú-Olo", Dili, 26 Maret 2004; Cornelio Gama (L-7), Baucau, 9 April 2003; dan Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin, Submisi kepada CAVR, CD. No. 18.
133. Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin, Submisi kepada CAVR, CD No. 18; Xanana Gusmão, "Message to the Nation of H.E. The President of the Republic Kay Rala Xanana Gusmão on the Occasion of Falintil Day Commemoration," Uaimori (Viqueque), 20 Agustus 2003. (Terjemahan bahasa Inggris ada pada <www.etan.org/et2003/agustus/17-23/20fal.htm>).
134. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, bagian II, Dili, 10 Agustus 2004.
135. Wawancara CAVR dengan Francisco Guterres "Lú-Olo", Dili, 26 Maret 2004 dan Cornelio Gama, Baucau, 9 April 2004; Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin, Submisi kepada CAVR, CD No. 18.
136. Wawancara CAVR dengan Cornelio Gama, Baucau 9 April 2004.
137. Wawancara CAVR dengan Taur Matan Ruak, bagian II, Dili, 14 Juni 2004.
138. Wawancara CAVR dengan Aleixo Ximenes, Dili, 2 Februari 2004.
139. Wawancara CAVR dengan Cornelio Gama, Baucau, 9 April 2003; Taur Matan Ruak, bagian II, Dili, 14 Juni 2004; Francisco Guterres "Lú-Olo", Dili 26 Maret 2003; Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin, Submisi kepada CAVR, CD No. 18.
140. "Reajustamento Estrutural da Resistência e Proposta de Paz" dalam Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo, Uma Pátria*, hal. 98.
141. Wawancara CAVR dengan Taur Matan Ruak, bagian II, Dili, 14 Juni 2004.
142. Pereira, "The National Council of Maubere Resistance (CNRM), Overview of the History of the Struggle of East Timor."
143. Xanana Gusmão, "Message to the Nation," Uaimori (Viqueque), 20 Agustus 2003.
144. Xanana Gusmão, "Message to the National Timorese Convention" (pesan untuk konferensi pembentukan CNRT di Peniche, Portugal, 1998), dalam Xanana Gusmão, *To Resist is to Win!*, hal. 214.
145. Adelino Gomes, wawancara dengan Xanana Gusmão, 2-3 Juni 1991, dimuat dalam *O Publico*, 6 September 1991, dicetak ulang dalam Xanana Gusmão, *To Resist is To Win!*, hal. 149.
146. "Reajustamento Estrutural da Resistência Nacional e Proposta da Paz," dalam Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo, Uma Pátria*, hal. 99.
147. Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin, Submisi kepada CAVR, CD No. 18.
148. Pereira, "The National Council of Maubere Resistance (CNRM), Overview of the History of the Struggle of East Timor"; Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, hal. 34.
149. Pereira, "The National Council of Maubere Resistance (CNRM), Overview of the History of the Struggle of East Timor."
150. Pereira, "The National Council of Maubere Resistance (CNRM), Overview of the History of the Struggle of East Timor."
151. "Fretilin: Roots of the Friction," *Fitun* (London), No. 11, September 1993, kemudian dipasang pada [reg.easttimor <www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1993/10/13/0006.html>](http://reg.easttimor/www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1993/10/13/0006.html).
152. Pereira, "The National Council of Maubere Resistance (CNRM), Overview of the History of the Struggle of East Timor"; "Reajustamento Estrutural da Resistência," dalam Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo, Uma Pátria*, hal. 102, catatan kaki no. 14.
153. "Reajustamento Estrutural da Resistência e Proposta da Paz," dalam Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo, Uma Pátria*, hal. 102-103.
154. Pereira, "The National Council of Maubere Resistance (CNRM), Overview of the History of the Struggle of East Timor."

155. Carla Baptista, "Timorese Summit Meeting," *Diario de Noticias*, 16 Maret 1995 tersedia pada <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1995/03/29/0009.html>.
156. Xanana Gusmão, "Message to the East Timor Talks Campaign," dalam *To Resist is to Win!*, hal. 197.
157. Xanana Gusmão, "Message to the Timorese National Convention," dalam *To Resist is to Win!*, hal. 214.
158. Wawancara CAVR dengan Francisco Guterres "Lú-Olo", Dili, 26 Maret 2003.
159. "CNRT – National Council of Timorese Resistance," tersedia pada <<http://www.labyrinth.net.au/~ftimor/cnrt.html>>.
160. "Reajustamento Estrutural da Resistência e Proposta da Paz," dalam Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo, Uma Pátria*, hal. 103.
161. Xanana Gusmão, "Message to the Nation," Uaimori (Viqueque), 20 Agustus 2003.
162. "Reajustamento Estrutural da Resistência e Proposta de Paz," dalam Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo, Uma Pátria*, hal. 102.
163. Pidato Xanana Gusmão pada upacara transisi Falintil ke FDTL, Aileu, 1 Februari 2002 (versi Inggris, "Address to the Transition Ceremony of Falintil to the New East Timor Defense Force" ada pada <<http://www.pcug.org.au/~wildwood/febzanana.htm>>.
164. Dikutip dalam Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, hal. 35.
165. Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, hal. 36.
166. Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, hal. 46; Xanana Gusmão, "Address to the Transition Ceremony of Falintil," 1 Februari 2001, hal. 2.
167. "Reajustamento Estrutural da Resistência e Proposta da Paz," dalam Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo, Uma Pátria*, hal. 106-107.
168. Pereira, "The National Council of Maubere Resistance (CNRM), Overview of the History of the Struggle of East Timor."
169. Wawancara CAVR dengan Francisco Guterres "Lú-Olo", Dili, 26 Maret 2003.
170. Wawancara CAVR dengan Taur Matan Ruak, Dili, 14 Juni 2004.
171. Wawancara CAVR dengan Cornelio Gama (L-7), mantan Komandan Kedua Região 3, Baucau, 9 April 2003.
172. Wawancara CAVR dengan António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004; Henrique Belmiro da Costa, Dili, 25 Mei 2004; Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
173. Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004.
174. Wawancara CAVR dengan Taur Matan Ruak, Dili, 14 Juni 2004.
175. Wawancara CAVR dengan António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004; Francisco Guterres "Lú-Olo", Dili, 26 Maret 2003; Constâncio Pinto dan Matthew Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance*, Boston, South End Press, 1997, hal 96-97.
176. Pinto dan Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle*, hal. 3; Constâncio Pinto, "The Student Movement and the Independence Struggle in East Timor: An Interview," dalam Richard Tanter, Mark Selden & Stephen R. Shalom (penyunting), *Bitter Flowers, Sweet Flowers: East Timor, Indonesia and The World Community*, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers Inc., hal. 34.
177. Wawancara CAVR dengan Ricardo Ribeiro, Dili, 14 Mei 2004.
178. Wawancara CAVR dengan Avelino Coelho Silva, Dili, 17 Juli 2004.
179. Pinto dan Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle*, hal. 124.
180. Wawancara CAVR dengan Avelino Coelho Silva, Dili, 17 Juli 2004.
181. Wawancara CAVR dengan Avelino Coelho Silva, Dili, 17 Juli 2004.
182. Pinto dan Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle*, hal. 123.
183. Wawancara CAVR dengan Gregório Saldanha, Dili, 5 Juni 2004.
184. Wawancara CAVR dengan António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 8 Desember 2003.
185. Wawancara CAVR dengan Gregório Saldanha, Dili, 5 Juni 2004 dan José Manuel Fernandes, Dili, 31 Oktober 2002.
186. Wawancara CAVR dengan Gregório Saldanha, Dili, 5 Juni 2004.
187. Wawancara CAVR dengan Francisco Guterres "Lú-Olo", Dili, 26 Maret 2003.
188. Wawancara CAVR dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
189. Wawancara CAVR dengan Francisco Guterres "Lú-Olo", Dili, 26 Maret 2003.

190. Agio Pereira, "Obituary for Konis Santana," *Timor Link*, No. 43, Juni 1998.
191. Wawancara CAVR dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004 dan António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 11 Februari 2004.
192. Wawancara CAVR dengan Eduardo de Deus Barreto, Gleno (Ermera), 12 Agustus 2003; wawancara CAVR dengan António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 11 Februari 2004; dan wawancara CAVR dengan José da Silva Amaral, Ossu (Viqueque), 27 Februari 2003.
193. Wawancara CAVR dengan Francisco Guterres "Lú-Olo", Dili, 26 Maret 2003.
194. Wawancara CAVR dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
195. Wawancara CAVR dengan António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 11 Februari 2004.
196. Wawancara CAVR dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004 dan wawancara CAVR dengan Marito Reis, Baucau, 17 November 2002.
197. Wawancara CAVR dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004 dan wawancara CAVR dengan Marito Reis, Baucau, 17 November 2002.



Chega!

Bagian **6.**

Profil pelanggaran hak asasi manusia
di Timor-Leste, 1974-1999

Bagian 6. Profil pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste, 1974-1999

529 | Pendahuluan

530 | Rangkuman temuan penting

530 | Pelanggaran fatal

531 | Pemandahan

531 | Pelanggaran nonfatal

532 | Tinjauan manajemen informasi dan metode pengumpulan data Komisi

533 | Estimasi pelanggaran bersejarah di Timor-Leste dan keterbatasannya

533 | Estimasi bersejarah jumlah kematian yang berhubungan dengan konflik di Timor-Leste (1974 - 1999)

535 | Bukti terdahulu dari migrasi dan pemindahan paksa

536 | Pelanggaran nonfatal di Timor-Leste

536 | Pelanggaran-pelanggaran fatal: analisis dari keseluruhan lingkup, pola, kecenderungan, dan tingkat pertanggungjawaban untuk pelanggaran fatal dan pemindahan di Timor-Leste, 1974-1999

536 | Latar belakang dan tinjauan analisis statistik pelanggaran fatal

538 | Tujuan-tujuan analisis

538 | Tinjauan data dan metode

540 | Perkiraan-perkiraan pembunuhan, kematian karena kelaparan dan sakit, dan pemindahan

540 | Pembunuhan

542 | Kematian karena kelaparan dan sakit

547 | Pemindahan

550 | Analisis statistik deskriptif mengenai pelanggaran fatal yang dilaporkan pada Komisi

550 | Pola lintas-waktu pembunuhan dan penghilangan para non-petempur yang dilaporkan

553 | Pola lintas-ruang pembunuhan dan penghilangan dari para non-petempur yang dilaporkan

554 | Pola lintas-waktu dan lintas-ruang pembunuhan dan penghilangan para non-petempur yang dilaporkan

556 | Pola pembunuhan dan penghilangan dari para non-petempur yang dilaporkan menurut pertanggungjawaban institusional yang terkait

- 560 | Pola kasus pembunuhan dan penghilangan non-petempur yang dilaporkan terhadap korban perorangan dan kelompok
- 564 | Pola dari pembunuhan dan penghilangan non-petempur yang dilaporkan menurut karakteristik demografis dan afiliasi politik korban
- 567 | Hubungan antara kematian terkait konflik dengan lamanya penahanan

571 | Pelanggaran-pelanggaran nonfatal

- 571 | Pengantar
- 572 | Tinjauan dari temuan statistik mengenai pelanggaran nonfatal
- 574 | Keterangan mendalam analisis statistik pelanggaran nonfatal
 - 574 | Distribusi keseluruhan pelanggaran nonfatal yang dilaporkan
 - 578 | Tiga tahap kekerasan skala besar di Timor-Leste
 - 581 | Tingkatan pertanggungjawaban institusional yang dilaporkan untuk pelanggaran nonfatal
 - 581 | **Distribusi keseluruhan dari pertanggungjawaban institusional untuk pelanggaran nonfatal yang dilaporkan**
 - 582 | **Pola-pola lintas waktu pertanggungjawaban institusional untuk pelanggaran nonfatal**
 - 594 | Variasi dalam pelanggaran nonfatal yang dilaporkan lintas wilayah
 - 597 | Pelanggaran nonfatal lintas ruang dan waktu
 - 598 | Demografi usia - jenis kelamin korban untuk pelanggaran nonfatal yang dilaporkan
 - 598 | **Pelaporan tingkat informasi usia dan jenis kelamin bagi korban**
 - 599 | **Analisis korban berdasarkan jenis kelamin**
 - 602 | **Analisis korban berdasarkan umur**
 - 605 | **Analisis korban berdasarkan umur dan jenis kelamin**
- 612 | Perbandingan antara pemantauan Hak Asasi Manusia retrospektif dan pemantauan dalam masa yang sama
- 614 | Sifat pelanggaran terhadap individu dan kelompok
- 620 | Penggunaan penahanan dan sifat pelanggaran yang dilakukan selama masa penahanan
 - 620 | **Hubungan antara penahanan dan bentuk-bentuk penganiayaan fisik**
 - 621 | **Pola-pola pelanggaran yang dilakukan selama masa penahanan**
 - 627 | **Pola-pola statistik yang dilaporkan tentang penahanan di Ataúro**
- 629 | Pola pelanggaran menurut afiliasi politik korban yang dilaporkan

..... 634 | Studi kasus Mau Chiga: suatu analisis kuantitatif pelanggaran yang terjadi selama operasi menumpas Resistansi

634 | Pendahuluan

634 | Latar belakang usaha pendokumentasian

634 | Keterbatasan data

635 | Latar belakang historis

636 | Analisis statistik deskriptif pelanggaran yang dilaporkan pada Proyek Dokumentasi Mau Chiga

636 | Laporan pemindahan dan penangkapan yang diderita penduduk Mau Chiga

636 | **Profil demografis para korban pemindahan dan penangkapan**

637 | **Pertanggungjawaban pemindahan dan tindak penangkapan dalam skala besar terhadap penduduk Mau Chiga**

637 | **Pola tindak pemindahan dan penangkapan lintas waktu**

638 | **Pola tindak pemindahan dan penangkapan lintas ruang geografis dan lamanya penahanan**

640 | Pelanggaran fatal yang diderita penduduk Mau Chiga

640 | **Distribusi pelanggaran fatal lintas waktu dan penyebab kematian yang dilaporkan yang dialami penduduk Mau Chiga**

641 | **Pola pertanggungjawaban yang diterakan untuk pelanggaran fatal yang dilaporkan terjadi pada penduduk Mau Chiga**

641 | **Pola pelanggaran fatal terhadap penduduk Mau Chiga menurut afiliasi politik korban**

643 | **Pola pelanggaran-pelanggaran fatal terhadap penduduk Mau Chiga yang dilaporkan menurut usia dan jenis kelamin korban**

..... 644 | Ringkasan dan kesimpulan

Daftar tabel:

- 552 | **Tabel 1** : Penghitungan kejadian pembunuhan penduduk sipil, 1975
- 556 | **Tabel 2** : Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan
- 560 | **Tabel 3** : Persentase pertanggungjawaban atas pembunuhan yang dilaporkan, berdasarkan periode, 1975 - 1999
- 569 | **Tabel 4** : Pelanggaran yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan distrik, 1974 - 1999
- 570 | **Tabel 5** : Pelanggaran fatal yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis pelanggaran, 1974 - 1999
- 571 | **Tabel 6** : Pelanggaran fatal yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan tahapan, 1974 - 1999
- 575 | **Tabel 7** : Pelanggaran nonfatal berdasarkan sumber data, 1974 - 1999
- 577 | **Tabel 8** : Distribusi relatif korban per pelanggaran, data CAVR
- 577 | **Tabel 9** : Distribusi relatif korban per pelanggaran, data Fokupers
- 578 | **Tabel 10** : Distribusi relatif korban per pelanggaran, data Amnesty International
- 582 | **Tabel 11** : Pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi
- 595 | **Tabel 12** : Pelanggaran berdasarkan distrik
- 600 | **Tabel 13** : Pola korban menurut jenis kelamin
- 600 | **Tabel 14** : Pola korban menurut jenis kelamin dalam lintas waktu
- 602 | **Tabel 15** : Pola korban menurut jenis kelamin di tiap distrik
- 603 | **Tabel 16** : Pola korban menurut usia
- 603 | **Tabel 17** : Pola korban menurut usia per tahun, 1974 - 1999
- 605 | **Tabel 18** : Pola korban menurut usia per distrik
- 612 | **Tabel 19** : Tabel distribusi data berdasarkan data CAVR, Fokupers, Amnesty International
- 623 | **Tabel 20** : Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis pelanggaran, 1974 - 1999
- 624 | **Tabel 21** : Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan tahap, 1974 - 1999
- 625 | **Tabel 22** : Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan distrik, 1974 - 1999
- 626 | **Tabel 23** : Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 626 | **Tabel 24** : Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan usia korban, 1974 - 1999
- 638 | **Tabel 25** : Tabel penyebaran lamanya periode dari peristiwa pemindahan penduduk Mau Chiga, 1982 - 1985
- 639 | **Tabel 26** : Tabulasi silang lamanya periode tindak pemindahan penduduk Mau Chiga menurut lokasinya, 1982 - 1985
- 642 | **Tabel 27** : Tabel penyebaran pelanggaran fatal yang dilaporkan menurut afiliasi politik korban, 1974 - 1999
- 642 | **Tabel 28** : Penyebaran pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilaporkan menurut afiliasi politik dan lokasi geografis, 1974 - 1999

Daftar grafik:

- 540 | **Grafik 1** : Perkiraan jumlah total pembunuhan di Timor-Leste
- 541 | **Grafik 2** : Perkiraan total pembunuhan di Timor-Leste
- 544 | **Grafik 3** : Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste
- 545 | **Grafik 4** : Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste
- 546 | **Grafik 5** : Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste
- 548 | **Grafik 6** : Perkiraan peristiwa pemindahan di Timor-Leste (dengan rentang kesalahan)
- 549 | **Grafik 7** : Jumlah total rumahtangga yang terpindahkan di Timor-Leste berdasarkan daerah
- 551 | **Grafik 8** : Jumlah kejadian pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 552 | **Grafik 9** : Jumlah kejadian penghilangan yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 553 | **Grafik 10** : Penghitungan pelanggaran yang dilaporkan, berdasarkan jenis dan distrik
- 554 | **Grafik 11** : Jumlah penghilangan berdasarkan wilayah secara lintas-waktu, 1974 - 1999
- 555 | **Grafik 12** : Jumlah pembunuhan penduduk sipil secara lintas-waktu, 1974 - 1999
- 558 | **Grafik 13** : Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974 - 1999, yang dilakukan oleh satuan teritorial
- 558 | **Grafik 14** : Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974 - 1999, yang dilakukan oleh satuan nonteritorial
- 559 | **Grafik 15** : Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974 - 1999, yang dilakukan oleh pasukan Pertahanan Sipil
- 561 | **Grafik 16** : Jumlah korban penduduk sipil berdasarkan ukuran kelompok, 1974 - 1999
- 561 | **Grafik 17** : Jumlah korban tindakan penghilangan berdasarkan ukuran kelompok, 1974 - 1999
- 562 | **Grafik 18** : Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 563 | **Grafik 19** : Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 564 | **Grafik 20** : Angka tindak pembunuhan penduduk sipil, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 565 | **Grafik 21** : Angka tindak pembunuhan penduduk sipil, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 565 | **Grafik 22** : Tingkat pelanggaran pembunuhan penduduk sipil yang spesifik berdasarkan usia-jenis kelamin (per10.000 orang), 1974 - 1999
- 566 | **Grafik 23** : Tingkat pelanggaran pembunuhan penduduk sipil yang spesifik berdasarkan usia-jenis kelamin (per10.000 orang), 1974 - 1999
- 566 | **Grafik 24** : Tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 567 | **Grafik 25** : Tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 568 | **Grafik 26** : Jumlah tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 568 | **Grafik 27** : Jumlah tindak penahanan yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 579 | **Grafik 28** : Jumlah pelanggaran nonfatal yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 580 | **Grafik 29** : Jumlah penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan, 1999
- 581 | **Grafik 30** : Pelanggaran dalam lintas-waktu
- 583 | **Grafik 31** : Jumlah pelanggaran nonfatal yang dikaitkan dengan Fretilin, UDT, dan Apodeti, 1975
- 584 | **Grafik 32** : Pelanggaran dalam lintas-waktu

- 585** | **Grafik 33** : Pelanggaran nonfatal yang dilakukan oleh satuan Pertahanan Sipil dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 585** | **Grafik 34** : Pelanggaran yang dilakukan oleh Kopassus dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 586** | **Grafik 35** : Pelanggaran yang dilakukan oleh Polisi dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 586** | **Grafik 36** : Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 587** | **Grafik 37** : Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1999
- 588** | **Grafik 38** : Tindak penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 589** | **Grafik 39** : Tindak penyiksaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 590** | **Grafik 40** : Tindak penganiayaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 590** | **Grafik 41** : Tindak penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 591** | **Grafik 42** : Tindak penyiksaan yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999
- 591** | **Grafik 43** : Tindak penganiayaan yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999
- 592** | **Grafik 44** : Tindak pelanggaran berbasis seks yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 593** | **Grafik 45** : Tindak pelanggaran berbasis seks yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999
- 594** | **Grafik 46** : Tindak pelanggaran ekonomi/properti yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 596** | **Grafik 47** : Bagan pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik
- 597** | **Grafik 48** : Jumlah pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik
- 598** | **Grafik 49** : Jumlah pelanggaran nonfatal berdasarkan wilayah dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 606** | **Grafik 50** : Tingkat penahanan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 606** | **Grafik 51** : Tingkat penyiksaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 607** | **Grafik 52** : Tingkat penganiayaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 607** | **Grafik 53** : Tingkat penahanan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 608** | **Grafik 54** : Tingkat penyiksaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 608** | **Grafik 55** : Tingkat penganiayaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 609** | **Grafik 56** : Jumlah tindak pemerkosaan yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 609** | **Grafik 57** : Tingkat pemerkosaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 610** | **Grafik 58** : Tingkat perbudakan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 610** | **Grafik 59** : Tingkat perbudakan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 611** | **Grafik 60** : Jumlah kekerasan seksual yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999

- 611** | **Grafik 61** : Tingkat kekerasan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 614** | **Grafik 62** : Pelanggaran dalam lintas-waktu
- 615** | **Grafik 63** : Jumlah korban tindakan penahanan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974 - 1999
- 615** | **Grafik 64** : Jumlah korban tindakan penyiksaan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974 - 1999
- 616** | **Grafik 65** : Jumlah korban tindakan penganiayaan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974 - 1999
- 617** | **Grafik 66** : Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 618** | **Grafik 67** : Jumlah tindakan penyiksaan yang tercatat, dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 618** | **Grafik 68** : Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 619** | **Grafik 69** : Jumlah tindakan pengancaman yang tercatat, dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 619** | **Grafik 70** : Jumlah tindakan kekerasan berbasis seksual yang tercatat, dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 620** | **Grafik 71** : Jumlah pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik
- 621** | **Grafik 72** : Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 628** | **Grafik 73** : Jumlah tahanan yang tercatat di Ataúro, Juni 1980 - Oktober 1984
- 628** | **Grafik 74** : Jumlah penahanan yang tercatat, di dalam dan di luar Ataúro, 1974 - 1999
- 629** | **Grafik 75** : Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 630** | **Grafik 76** : Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1979
- 630** | **Grafik 77** : Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1980 - 1989
- 631** | **Grafik 78** : Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1990 - 1998
- 631** | **Grafik 79** : Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1999
- 632** | **Grafik 80** : Jumlah penahanan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban
- 632** | **Grafik 81** : Jumlah penyiksaan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban
- 633** | **Grafik 82** : Tindakan penganiayaan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 633** | **Grafik 83** : Tindakan pelanggaran properti/ekonomi yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 637** | **Grafik 84** : Jumlah korban pemindahan yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 640** | **Grafik 85** : Pelanggaran fatal dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 644** | **Grafik 86** : Jumlah kematian akibat kelaparan/sakit yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999

Profil pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste, 1974-1999

Pendahuluan

1. Guna mencapai tujuan inti dari mandatnya untuk mencari kebenaran, Komisi mengembangkan sejumlah program, termasuk penelitian empiris kualitatif dan analisis statistik kuantitatif. Bab ini menyajikan temuan yang dihasilkan dari kerja statistik Komisi dan membahas pendekatan metodologis yang digunakan untuk sampai pada temuan ini.
2. Segmen pendahuluan, yaitu 6.1.1, memberi rangkuman singkat temuan penting, ulasan konteks sejarah yang mendasari kerja demografis dan statistik Komisi, dan garis besar keputusan mengenai manajemen informasi Komisi.
3. Segmen 6.2 menyajikan perkiraan demografik dan statistik dari keseluruhan cakupan, pola, dan kecenderungan pelanggaran fatal di Timor-Leste antara 1974 dan 1999 serta tingkat pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Perkiraan ini diperoleh dari analisis statistik dan demografis dari data yang dikumpulkan oleh Komisi dan data eksternal dari badan-badan statistika resmi serta lembaga hak asasi manusia. Walaupun pemindahan (*displacement*) belum tentu merupakan pelanggaran fatal, tapi ia terkait erat dengan kematian yang berhubungan dengan konflik dan kelaparan. Karena itu, analisis pemindahan skala besar diikutsertakan dalam segmen 6.2.
4. Segmen 6.3 menyajikan analisis terhadap pola umum pelanggaran nonfatal. Komisi tidak berhasil menemukan sumber-sumber yang memiliki informasi ekstensif tentang pelanggaran nonfatal selain dari kesaksian-kesaksian yang ada pada Komisi. Karena itu, tidak dapat dibuat perkiraan kuantitatif yang seksama dari keseluruhan pelanggaran nonfatal selama 1974 – 1999. Sehingga, analisis statistik yang dideskripsikan dalam bagian ini terfokus pada pandangan makro mengenai pola dan kecenderungan pelanggaran nonfatal seperti yang terungkap dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi.
5. Segmen 6.4 menyajikan studi kasus statistik mengenai pelanggaran yang dilaporkan oleh komunitas Desa Mau Chiga dalam rangka pemberontakan oleh pihak Resistansi di wilayah mereka pada Agustus 1982, disertai pukulan balik oleh angkatan bersenjata Indonesia. Studi kasus ini dipakai untuk menyoroti pola serta kecenderungan penahanan

sewenang-wenang, pemindahan paksa, dan kematian akibat konflik yang dialami pada tahap 'konsolidasi dan normalisasi' pendudukan Indonesia di Timor-Leste di seluruh wilayah.'

6. Segmen 6.5 memberikan ringkasan singkat beserta kesimpulan.

7. Selebihnya, Lampiran menerangkan cara-cara pengumpulan data serta teknik statistik yang dipakai oleh Komisi untuk mencapai kesimpulannya. Di sini terdapat latar belakang metodologis dan pembahasan terperinci mengenai berbagai set data beserta metode pengolahan, teknik penghubungan, dan teknik perkiraan yang telah dipakai.

Rangkuman temuan penting

Pelanggaran fatal

8. Komisi memperkirakan bahwa batas minimal untuk jumlah kematian yang berkaitan dengan konflik selama periode acuan Komisi, 1974 – 1999, adalah 102.800 (+/- 12.000). Perkiraan ini diambil dari (i) perkiraan sebesar 18.600 untuk jumlah keseluruhan pembunuhan (+/- 1.000) dengan menggunakan teknik '*multiple systems estimation*' (MSE) dan (ii) perkiraan sebesar 84.200 (+/- 11.000) untuk jumlah kematian karena kelaparan dan sakit, yang melampaui perkiraan jumlah total jika tingkat kematian karena kelaparan dan sakit adalah sama dengan tingkat kematian tersebut di masa damai sebelum invasi.

9. Pola perkiraan pelanggaran fatal secara keseluruhan menunjukkan angka yang tinggi untuk pembunuhan dan kematian karena kelaparan dan sakit selama masa awal periode pasca-invasi antara 1975 dan 1980. Jumlah kematian yang dikaitkan para responden dengan 'kelaparan atau sakit' melonjak ke tingkat yang paling tinggi selama periode langsung sesudah invasi, yaitu 1975 – 1980. Meskipun begitu, 1999 ditandai dengan angka yang tinggi untuk perkiraan pembunuhan, yaitu 2.634 (+/- 626).

10. Pola dan kecenderungan kematian karena kelaparan dan sakit dan karena pembunuhan berkorelasi secara positif dalam lintas waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kedua gejala itu mempunyai sebab pokok yang sama pada tahap pertama konflik. Dari kejadian pembunuhan dan orang hilang yang dilaporkan dalam proses pengambilan pernyataan Komisi, 57,6% (2.947/5.120) keterlibatan pelaku tindakan dalam pelanggaran fatal dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi, dan 32,3% (1.654/5.120) dengan pasukan pembantu asal Timor-Leste (seperti para milisi, pasukan pertahanan sipil, dan pejabat lokal yang bekerja dalam pemerintahan Indonesia).

.....
* Di bagian ini, untuk keperluan metode penelitian kuantitatif, Komisi menetapkan wilayah dengan cara berikut: Wilayah Timur meliputi Lautém, Viqueque, Baucau, dan Manatuto; Wilayah Tengah meliputi Manufahi, Aileu, Dili, dan Ainaro; sedangkan Wilayah Barat meliputi Ermera, Liquiçá, Covalima, dan Bononaro.

Pemindahan

11. Peristiwa pemindahan terjadi secara luas: 55,5% dari rumahtangga yang disurvei melaporkan satu kali atau lebih peristiwa pemindahan. Jumlah total peristiwa pemindahan yang dilaporkan adalah sebanyak 2.011 antara 1974 dan 1999.*

12. Sebagian besar pemindahan terjadi antara 1975 dan 1980. Tahun saat pemindahan paling banyak terjadi adalah 1975 dan 1976, dengan berturut-turut 61.400 (+/- 13.300) dan 59.800 (+/- 7.200) peristiwa pemindahan. Jumlah peristiwa pemindahan pada 1999 jauh lebih sedikit, yaitu kira-kira 28.100 (+/- 5.600) peristiwa.

13. Sebagian besar pemindahan terjadi secara lokal. Dari keseluruhan peristiwa pemindahan, 54,3% terjadi di satu kecamatan, 15,6% terjadi di satu kabupaten, 17,4% terjadi di satu wilayah, 9,3% terjadi di Timor-Leste, dan 2,4% terjadi di luar Timor-Leste.† Penemuan ini mungkin terbatas oleh restriksi bahwa orang-orang yang berada di kamp pengungsian di Timor Barat tidak turut diwawancarai. Banyak pemindahan terjadi berturut-turut dengan cepat: 22,2% dari peristiwa pemindahan berlangsung dalam waktu satu bulan atau kurang, dan 50,1% berlangsung dalam waktu satu tahun atau kurang. Tapi, pemindahan lainnya berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sehingga rata-rata periode pemindahan adalah 46,7 bulan.‡

14. Lembaga yang dilaporkan penduduk sebagai kelompok yang paling sering menyuruh mereka pindah adalah militer Indonesia (46,4%), diikuti oleh Fretilin/Falintil (15,0%), dan kelompok milisi (8,8%).§ Responden melaporkan bahwa “konflik” merupakan motivasi dari 52,3% keseluruhan pemindahan mereka, dengan tambahan 16,3% “dipaksa oleh Militer Indonesia”.

Pelanggaran nonfatal

15. Pola temporal pelanggaran nonfatal yang dilaporkan mirip dengan pola pelanggaran fatal: pelanggaran nonfatal besar-besaran pada tahun-tahun awal invasi dan pendudukan, diikuti oleh pelanggaran yang relatif rendah pada masa tahun-tahun konsolidasi dan normalisasi, lalu kenaikan pelanggaran kembali terjadi pada 1975. Pelanggaran-pelanggaran nonfatal sekitar masa invasi Indonesia pada 1975 paling banyak terjadi di wilayah barat dan tengah; setelah 1976, fokus pelanggaran nonfatal bergeser ke wilayah timur.

16. Pola statistik yang diamati dari penahanan dan penyiksaan yang dilaporkan menunjukkan bahwa seiring waktu (dan terutama setelah 1984) praktik penahanan

* Pada saat sensus 1990, terdapat kira-kira 4,5 orang per rumahtangga. Sensus 2004 mencatat penambahan sampai kira-kira 4,75 orang per rumahtangga (924.642/194.943). Selang kepercayaan nominal (*nominal confidence interval*) adalah 51,8%-59,2% dari rumahtangga ini.

† Ambang kesalahan nominal (*nominal margin of error*) untuk pemindahan dalam satu kecamatan adalah sebesar +/-10,4%, dan 4,6% atau kurang untuk perkiraan-perkiraan lain.

‡ Ambang kesalahan nominal adalah 41-52 bulan

§ Ambang kesalahan nominal adalah +/- 4,2%.

sewenang-wenang menjadi lebih bersasaran dan semakin umum digunakan bersama tindak penyiiksaan. Pada tahun-tahun awal invasi ada sekitar tiga kasus penahanan untuk setiap kasus penyiiksaan yang dilaporkan. Setelah 1985, kedua pelanggaran itu makin tampak lebih erat terkait satu sama lain, dengan jumlah penahanan yang dilaporkan kurang-lebih sama dengan tindak penyiiksaan setiap tahunnya.

17. Keseluruhan temuan kuantitatif Komisi konsisten dengan hipotesis bahwa individu-individu yang ditahan selama periode acuan Komisi mengalami kerentanan semakin tinggi terhadap penyiiksaan dan penganiayaan. Penyiiksaan dan penganiayaan lebih sering dilaporkan oleh korban-korban yang ditahan selama periode acuan Komisi: dari pelanggaran-pelanggaran penyiiksaan yang didokumentasikan oleh Komisi, 83,6% (9.303/11.123) diderita oleh korban yang ditahan selama masa konflik. Pelanggaran yang paling sering terjadi dalam masa penahanan yang diketahui adalah penyiiksaan (46,9%, 4.267/9.094), penganiayaan (30,8%, 2.798/9.094), dan pengancaman (7,0%, 634/9.094).

18. Demografi korban bervariasi untuk berbagai tipe pelanggaran. Dibanding dengan keseluruhan penduduk Timor-Leste, laki-laki paruhbaya mengalami tingkat tertinggi bentuk-bentuk pelanggaran nonfatal seperti penahanan, penyiiksaan, dan penganiayaan. Sebaliknya, pelanggaran seksual hampir seluruhnya disasarkan pada perempuan, dengan 90,2% (769/853) pelanggaran seksual yang dilaporkan dialami oleh perempuan.

19. Data kuantitatif Komisi menunjukkan perbedaan nyata dalam pola pertanggungjawaban pelanggaran nonfatal antara 1975 dan 1998, dibandingkan dengan pelanggaran nonfatal pada 1999. Khususnya, antara 1975 dan 1998, 51,7% (11.658/22.547) tindak penahanan sewenang-wenang dikaitkan dengan tindakan militer Indonesia dibandingkan dengan 8,4% (1.897/22.457) tindak penahanan yang hanya dikaitkan dengan pasukan pembantu asal Timor-Leste atau gabungan antara pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu Timor-Leste. Tapi, 75,7% (2.104/2.779) dari tindak penahanan sewenang-wenang 1999 yang didokumentasi oleh Komisi dikaitkan baik dengan tindakan mandiri pasukan bantuan Timor-Leste atau kolaborasi dengan militer Indonesia dan polisi. 19,2% (534/2.779) tindak penahanan yang didokumentasi yang terjadi pada 1999 terkait hanya dengan militer Indonesia.

Tinjauan manajemen informasi dan metode pengumpulan data Komisi

20. Sebagian besar komisi kebenaran mendasarkan temuan empiris mereka pada basis data yang diperoleh dari pengumpulan kesaksian kualitatif skala besar. Dalam hal ini, CAVR tidak berbeda dengan komisi-komisi di Haiti, Afrika Selatan, atau Peru. Komisi-komisi kebenaran di negara-negara lain dapat memanfaatkan banyak informasi tambahan yang telah dikumpulkan oleh proyek-proyek hak asasi manusia pemerintah dan nonpemerintah. Sumber-sumber tambahan ini penting untuk membandingkan informasi dari tiga sumber (triangulasi) atau memahami pola

dan skala kejadian-kejadian hak asasi manusia dari sudut pandang selain materi kualitatif yang dimiliki sebuah komisi. Tanpa koraborasi dari luar, kerja komisi dapat saja dicap sebagai memihak.

21. CAVR tidak memiliki banyak sumber eksternal sehingga perlu diciptakan sumber-sumber baru. Pertama, Komisi mengembangkan basis-data pelanggaran hak asasi manusia, atau Human Rights Violations Database (HRVD), dari kesaksian-kesaksian naratif yang dikumpulkan melalui pernyataan langsung dari saksi atau korban. Ini dilakukan sebagai bagian dari proses sosialisasi Komisi, yang bermaksud memenuhi tujuan pencarian kebenaran serta memajukan rekonsiliasi dan penerimaan. Komisi menggunakan narasi HRVD untuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif.

22. Kedua, Komisi membuat survei tingkat kematian retrospektif (*retrospective mortality survey*, RMS) dari 1.396 rumahtangga yang dipilih secara acak dari sekitar 180.000 rumahtangga di Timor-Leste. Tiap rumahtangga yang dijadikan sampel memberikan informasi mengenai pola bermukim mereka dan anggota rumahtangga serta kerabat yang meninggal selama periode mandat Komisi. Survei tingkat kematian seperti ini umum dijalankan oleh kantor-kantor statistik pemerintah untuk menaksir kondisi-kondisi kesehatan atau memperbaiki hasil sensus. Otoritas kesehatan antarinstansi pemerintah dan para akademisi ahli demografi dan epidemiologi juga biasa melakukan survei semacam ini. Tapi, belum pernah ada sebelumnya komisi kebenaran yang melakukan survei rumahtangga yang disampel secara teliti.

23. Kelompok data ketiga yang dikumpulkan oleh CAVR adalah basis data sensus kuburan (*graveyard census database*, GCD). Setiap perkuburan umum di Timor-Leste dikunjungi, dan nama, tanggal lahir, serta tanggal kematian dicatat dari setiap makam yang memiliki informasi tersebut. Sekitar 327.000 catatan kuburan berhasil dikumpulkan; setelah pengulangan data dibersihkan, tersisa sekitar 319.000 kuburan dalam sampel tersebut, dan sekitar setengahnya memiliki informasi lengkap nama dan tanggal. Catatan-catatan makam sudah digunakan oleh para ahli demografi historis untuk merekonstruksi ulang pola-pola kematian bersejarah, tapi belum pernah ada komisi kebenaran yang menggunakan data sejenis ini sebelumnya sebagai bagian dari rekonstruksi ingatan sejarah. Dalam dunia pengukuran hak asasi manusia, ini adalah inovasi berharga yang sangat memperkaya pemahaman tentang masa lalu.

Estimasi pelanggaran bersejarah di Timor-Leste dan keterbatasannya

Estimasi bersejarah jumlah kematian yang berhubungan dengan konflik di Timor-Leste (1974 – 1999)

24. Skala kematian yang berkaitan dengan konflik selama pendudukan Indonesia di Timor-Leste telah cukup sering menjadi pokok perdebatan: perkiraan bervariasi

antara yang terendah 40.000 sampai lebih daripada 200.000.* Para komentator yang memiliki informasi terbaik menyimpulkan analisis mereka dengan rekomendasi agar dikumpulkan bukti langsung dan dianalisis untuk mendapatkan perkiraan yang lebih terpercaya. Misal saja, sejarawan Robert Cribb menyebutkan bahwa ada lima teknik untuk mengukur jumlah total kematian:

- laporan dari para pelaku
- menghitung jasad orang yang meninggal atau batu-batu nisan
- menangkap ingatan sejarah melalui wawancara
- perkiraan tidak langsung melalui catatan sensus
- perkiraan naluriah (“intuitif”) yang diproyeksikan dari apa yang diketahui para peneliti tentang kondisi setempat

25. Cribb mengeluhkan bahwa pada 1999 – 2001, saat dia menerbitkan serangkaian tulisan mengenai pokok permasalahan tersebut, semua perkiraan yang dapat diperoleh sampai saat itu, termasuk perkiraannya sendiri, terbatas pada dua metode yang paling lemah, yakni: perkiraan tidak langsung dan perkiraan intuitif. Dalam ulasannya yang luas mengenai kematian yang berhubungan dengan konflik di Timor-Leste, John Waddingham menulis: “Tapi, kita harus mengakui, bahwa sampai saat ini dari data-data yang ada mengenai jumlah keseluruhan korban kematian di Timor-Leste, belumlah bisa dihasilkan jumlah akurat yang diakui secara umum.”¹

26. Komisi benar-benar sadar akan kesensitifan dan kepentingan perkiraan pola mortalitas keseluruhan (*total mortality pattern*) maupun pola mortalitas teragregasi (*aggregated mortality pattern*). Komisi-komisi kebenaran lainnya (terutama yang di El Salvador, Guatemala, dan Peru) memanfaatkan daftar data kematian yang luas, meskipun tetap belum lengkap, yang sudah didokumentasikan sebelum komisi kebenaran itu mulai bekerja. Informasi seperti ini tidak dipunyai oleh CAVR, dan oleh sebab itu tiga set data baru telah diciptakan, yaitu: survei kualitatif dari responden yang merasa terdorong untuk memberikan kesaksian kepada Komisi; sampel probabilitas dari 1.396 rumahtangga yang pada masa lalunya mengalami kematian karena konflik; dan sensus kuburan di permakaman umum di Timor-Leste. Sumber-sumber ini sesuai dengan definisi Cribb yang kedua dan ketiga mengenai sumber data yang bisa digunakan untuk menganalisis korban kematian.

27. Sementara para aktivis hak asasi manusia kadang-kadang mengutip perbedaan yang besar antara satu perkiraan dengan yang lainnya sebagai bukti tingginya korban

.....
* Perkiraan yang berdasarkan data resmi Portugal, Indonesia, dan Gereja Katolik menunjukkan besarnya jumlah keseluruhan kematian, yaitu kira-kira 200.000. Lihat, misalnya, Ben Kiernan “The Demography of Genocide in Southeast Asia: The Deathtolls in Cambodia, 1975 – 1979, and East Timor, 1975 – 1980” *Critical Asian Studies* 35:4 (2003), hal. 585-597, dan Geoffrey Gunn, *East Timor and the United Nations: The Case for Intervention*. Red Sea Press. Lawrenceville, NJ: 1997, hal. 26 – 27. Untuk sisi yang lebih rendah, lihat Robert Cribb “How Many Deaths? Problems in the statistics of massacre in Indonesia (1965 – 1966) and East Timor (1975 – 1980)” dalam Ingrid Wessel dan Georgia Wimhoef, eds. *Violence in Indonesia*. Abera-Verl, Hamburg: 2001. John Waddingham memberikan ulasan perkiraan yang diperoleh dengan pendekatan “intuitif” dan metode tak langsung, lihat John Waddingham “Timor-Leste Death Toll Claims: a Proposal for Listing dan Critical Commentary,” submisi untuk CAVR, 14 Juli 2003.

mati karena pendudukan Indonesia di Timor-Leste, kelihatannya penjelasan yang mungkin [untuk perbedaan ini] adalah ketiadaan data penduduk dan demografis yang tepercaya pada periode tersebut. Sensus penduduk Timor-Leste yang terakhir sebelum pendudukan Indonesia adalah sensus yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Portugis 1970. Sensus-sensus juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada 1980 dan 1990, tetapi ketelitiannya dipertanyakan. Kecurigaan, ketakutan, dan penolakan secara umum penduduk Timor-Leste terhadap pemerintah yang melakukan sensus, serta seringnya peristiwa pemindahan, menghasilkan kesulitan pengukuran data.

28. Bahkan apabila sensus dari 1980 dan 1990 itu teliti, pendataan sensus-sensus tersebut atas jumlah penduduk semata tanpa pemecahan menurut data variabel pokok demografi (seperti usia dan jenis kelamin) banyak mengurangi kemungkinan bagi para ahli sosial untuk menerapkan teknik perkiraan demografis standar terhadap data penduduk resmi. Informasi kependudukan dari sumber-sumber nonpemerintah juga terbatas nilainya karena selama masa konflik, akses para pengamat independen dan kelompok kemanusiaan terhadap Timor-Leste sangat terbatas. Dalam hal Timor-Leste, Terence Hull, seorang ahli demografi, menulis bahwa “keragaman estimasi dalam publikasi BPS (Biro Pusat Statistik) bukannya merupakan indikasi manipulasi data untuk kepentingan politik, tetapi lebih karena sulitnya pemastian tingkat kematian untuk jumlah penduduk yang kecil, apabila untuk estimasinya kita memakai metode demografis tak langsung.”² Karena keterbatasan ini, perdebatan ilmiah mengenai korban mati di Timor-Leste waktu itu belum terpecahkan.

29. Banyak masalah dari para analis terdahulu terpecahkan dengan adanya publikasi hasil awal sensus Timor-Leste 2004, yang terbit pada Maret 2005. Analisis mortalitas yang dilakukan Komisi sangat banyak memakai data sensus yang baru untuk menghitung hasil survei Komisi sendiri dengan cara yang semestinya.

Bukti terdahulu dari migrasi dan pemindahan paksa

30. Kelompok-kelompok besar penduduk pernah dipindahkan selama terjadinya konflik, terutama pada tahun-tahun awal pendudukan (1975 – 1980) dan pada 1999. Misalnya, menurut angka-angka resmi dari pemerintah Indonesia, 268.644 atau 318.921 ‘orang yang terpindahkan’ (*displaced persons*) telah ditampung di 15 pusat penampungan pada Desember 1978.³ Laporan-laporan kualitatif dan penelitian Komisi sendiri menunjukkan bahwa orang-orang dipindahkan paksa ke kamp-kamp pemukiman kembali di mana rezim keamanan yang ketat sangat membatasi kesempatan mereka untuk bertani dan memperoleh akses ke sumber makanan (lihat Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan). Seperti halnya perkiraan mengenai kematian yang berhubungan dengan konflik, analisis demografis yang akurat mengenai pemindahan di Timor-Leste, terutama pada awal-awal tahun invasi, juga bermasalah karena hanya ada sedikit data. Hal ini terutama disebabkan oleh ketiadaan sistem pendaftaran administratif yang sistematis di seluruh negeri dan terbatasnya akses ke penduduk sipil yang diberikan kepada organisasi kemanusiaan internasional dan organisasi hak asasi selama masa konflik tersebut.

Pelanggaran nonfatal di Timor-Leste

31. Cakupan dan kedalaman informasi tentang situasi hak asasi manusia di Timor-Leste selama pendudukan Indonesia bervariasi dari waktu ke waktu. Hal ini terutama karena akses para pengamat hak asasi manusia mancanegara ke wilayah ini sangat dibatasi oleh pemerintah Indonesia. Terlebih lagi, akses oleh lembaga-lembaga kemanusiaan internasional (seperti Palang Merah Internasional atau ICRC dan Catholic Relief Services) ke daerah tersebut dibatasi hanya ke daerah-daerah tertentu dan periode waktu tertentu. Keterbatasan akses organisasi-organisasi internasional ke wilayah ini secara signifikan telah memengaruhi pengetahuan komunitas internasional tentang situasi hak asasi manusia di Timor-Leste.

Pelanggaran-pelanggaran fatal: analisis dari keseluruhan lingkup, pola, kecenderungan, dan tingkat pertanggungjawaban untuk pelanggaran fatal dan pemindahan di Timor-Leste, 1974 – 1999*

Latar belakang dan tinjauan analisis statistik pelanggaran fatal

32. Dalam analisis kematian karena konflik di Timor-Leste, berbagai pengarang menggunakan bermacam-macam istilah mengenai cara orang meninggal. Misal saja, sebuah tulisan pada 2002 mencatat bahwa di Maubisse, 5.021 dari 9.607 penduduk yang hidup pada 1975 *dibunuh* pada April 1979.⁴ Tapi, sumber asli pernyataan ini menyatakan bahwa desa tersebut “kehilangan” orang-orang ini; maksudnya, mereka mati dengan cara yang tidak dijelaskan lebih jauh.⁵

33. Analisis di sini membedakan antara kematian orang sipil karena kekerasan, yang disebut pembunuhan; kematian karena kelaparan dan sakit, yang sebagian memang disebabkan karena konflik tersebut; kematian para petempur; dan kematian lainnya.[†] Hanya pola dan ukuran besarnya pembunuhan penduduk sipil, kematian karena kelaparan dan sakit, dan orang-orang hilang yang akan diperkirakan dan dianalisis.

34. Perbedaan antara kematian karena kelaparan dan sakit dengan kematian karena pembunuhan berguna untuk dua alasan. Alasan pertama, orang atau lembaga yang menyebabkan kematian karena kekerasan yang disengaja mempunyai pertanggungjawaban langsung dan jelas atas kematian itu, sementara pertanggungjawaban

* Komisi dan Human Rights Data Analysis Group (HRDAG, Kelompok Analisa Data Hak Asasi Manusia) berterimakasih untuk komentar dan saran Profesor David Banks (Duke University), Profesor Claes Cassel (Statistics Sweden), Dr. Michael Cohen (US Department of Transportation), Dr. Peggy Jennings (Women's Rights International), Richard Öhrvall (Statistics Sweden), Dr. Fritz Scheuren (National Opinion Research Center dan American Statistical Association), Profesor Herbert F. Spier (University of Connecticut dan Columbia University), dan Dr. Shana Swiss (Women's Rights International).

† Kategori “lain” termasuk kecelakaan dan kematian pada waktu bersalin, di antara penyebab kematian lain. Kematian-kematian ini tidak ditanyakan secara khusus di dalam kuesioner.

untuk kematian karena kelaparan dan sakit lebih rumit. Kedua, jumlah pembunuhan jauh lebih sedikit dibanding dengan kematian karena kelaparan dan sakit di Timor-Leste antara 1975 dan 1999. Metode yang digunakan di sini untuk memperkirakan jumlah keseluruhan pembunuhan lebih tepat, dan rendahkira (*underestimate*) yang terjadi terhadap nilai totalnya tak separah yang terjadi pada perkiraan tingkat kematian akibat kelaparan dan penyakit.

35. Dalam bagian-bagian di bawah ini, perkiraan dibulatkan ke bilangan ratusan terdekat untuk memperlihatkan bahwa perkiraan selalu merupakan jumlah kurang-lebih dan harus ditafsirkan dengan suatu ambang kesalahan. Tapi, hitungan spesifik atas kematian yang telah terdokumentasi langsung dimasukkan ke daftar secara persis karena angka ini telah diketahui secara tepat. Data dasar statistik telah disediakan agar para ilmuwan dapat meneruskan menganalisa pola kematian baik karena pembunuhan maupun karena kelaparan dan sakit di Timor-Leste selama masa pendudukan Indonesia.*

36. Baik kematian karena pembunuhan maupun kematian karena kelaparan dan sakit mencapai titik lebih tinggi pada periode langsung setelah invasi, yaitu mulai akhir 1975 sampai 1979, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau dengan waktu lainnya sampai dengan 1999. Kedua sebab kematian itu mencapai puncak lain pada 1999, saat pembunuhan mencapai puncak tertinggi sejak 1975 – 1979 sedangkan kematian karena kelaparan dan sakit jauh lebih sedikit terjadi saat itu dibanding masa 1975 – 1979. Analisis Komisi menunjukkan bahwa selama periode 1975 – 1999, ada kurang lebih 18.600 orang bukan petempur yang terbunuh. Selanjutnya, diperkirakan ada lebih daripada 100.000 orang meninggal di atas jumlah yang akan meninggal pada masa damai akibat kelaparan dan penyakit.

37. Kedua rangkaian ini—pembunuhan serta kematian karena kelaparan dan sakit—mengikuti pola yang sama: koefisien korelasi antara perkiraan tahunan (dijelaskan di bawah) untuk jumlah pembunuhan dan jumlah kematian karena kelaparan dan sakit adalah 0,81, suatu tingkat yang termasuk amat tinggi untuk kebanyakan penemuan penelitian sosial.[†] Analisis terhadap pola pemindahan menunjukkan bahwa pemindahan mencapai puncak tertinggi pada periode 1975 – 1979. Korelasi yang tinggi antara perkiraan jumlah pembunuhan, jumlah kematian karena kelaparan dan sakit, dan jumlah pemindahan menunjukkan bahwa kejadian-kejadian itu berakibat dari kondisi dasar yang sama. Yaitu, ketiga gejala itu kelihatannya mempunyai sebab yang sama. Pola peningkatan yang cepat dalam jumlah pembunuhan, kematian karena kelaparan dan sakit, dan pemindahan pada masa awal pendudukan Indonesia sesuai dengan pernyataan bahwa pendudukanlah yang menyebabkan peningkatan angka kematian.

* Lihat <http://www.hrdag.org/timor> untuk salinan data statistik. Perhatikan bahwa di dalam data ini tidak ada informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi para saksi, korban, ataupun pelaku.

† Korelasi ini menghubungkan perkiraan jumlah tahunan pembunuhan berdasarkan MSE dengan perkiraan jumlah kematian karena lapar dan sakit dari RMS.

Tujuan-tujuan analisis

38. Analisis ini dimulai dengan tinjauan data dan metode yang relevan untuk analisis pelanggaran fatal dan pemindahan. Di segmen 6.2.4, disajikan perkiraan jumlah pembunuhan dan kematian karena kelaparan dan sakit. Untuk setiap cara kematian, perkiraan dari RMS dan MSE diperlihatkan dan diperbandingkan. Segmen pemindahan mengulas keseluruhan peristiwa pemindahan yang diperkirakan dan jumlah rumahtangga yang dipindahkan menurut lintas waktu dan ruang. Pada segmen 6.2.5 disajikan analisis deskriptif kematian yang dilaporkan kepada Komisi dalam HRVD. Analisis menetapkan pola-pola lintas waktu dan ruang, kematian kolektif, demografi, dan afiliasi politik korban, pertanggungjawaban institusional, dan hubungan antara penahanan dan kematian karena konflik.

Tinjauan data dan metode

39. Perkiraan pola-pola dan besarnya jumlah kematian didasarkan pada tiga sumber data asli yang dikumpulkan oleh Komisi, termasuk:

- Basis data pelanggaran hak asasi, Human Rights Violations Database (HRVD), berisi cerita naratif dari 7.669^{*} deponen mengenai pelanggaran yang mereka derita atau mereka saksikan pada periode 1974 – 1999. Narasi ini juga termasuk informasi mengenai kematian karena deprivation atau kekurangan [makanan dan obat-obatan] dan pembunuhan penduduk sipil. Para responden memilih sendiri untuk datang memberikan kesaksian mereka kepada Komisi. Karena itu, hasil proyek ini mungkin tidak mewakili keseluruhan orang yang terkena pelanggaran hak asasi manusia.
- Survei tingkat kematian retrospektif (RMS) merekam sejarah kematian dengan sampel probabilitas dari 1.396 rumahtangga. Di setiap rumahtangga, dua orang dewasa dipilih secara acak. Untuk responden laki-laki, orangtua dan saudara kandung responden tersebut juga dicatat, termasuk apakah mereka itu masih hidup atau sudah mati. Apabila mereka sudah mati, tanggal, tempat, dan cara kematiannya juga didata. Untuk responden wanita, anak-anak responden itu juga dicatat dengan cara yang sama. Dalam 60% rumahtangga, hanya responden dari satu jenis kelamin saja yang bisa diwawancarai, dan dengan begitu hanya ada satu responden yang memberikan informasi mengenai orangtua, saudara kandung, dan anak-anak.
- Sensus perkuburan umum di Timor-Leste, mendata lebih daripada 319.000 batu nisan (disebut GCD).

40. Setiap sumber data hanya mendokumentasikan sebagian kecil dari jumlah keseluruhan kematian di Timor-Leste selama masa 1975 – 1999. Bahkan pada waktu

.....
^{*} Tim Komisi mengumpulkan seluruhnya 7.824 pernyataan. Beberapa di antaranya (155 pernyataan) tidak disertakan dalam HRVD karena tidak menyebutkan pelanggaran yang terkait dengan mandat Komisi, atau pelanggaran yang mereka sebutkan tidak tercakup dalam masa acuan Komisi.

tidak ada konflik, tidak semua orang mati dikubur di perkuburan umum: Ada orang yang dikuburkan jauh dari lokasi tinggalnya atau ada juga orang yang dikuburkan di perkuburan keluarga. Apabila kondisi kematian amat parah, lebih sedikit orang yang dikuburkan dengan penanda yang resmi. Mutu penanda kubur terus merosot, sehingga pada waktu diadakan sensus kuburan pada 2003 – 2004, banyak batu nisan yang tidak bisa didokumentasikan karena informasi yang tertulis hampir tidak bisa dibaca lagi. Penanda kubur lainnya samasekali sudah hancur pada periode antara penguburan dan waktu GCD dikumpulkan.

41. Survei tingkat kematian retrospektif (RMS) memperlihatkan pengalaman yang dilaporkan dalam 1.396 rumahtangga, tetapi mengabaikan pengalaman dari hampir 190.000 rumahtangga yang tidak disampel. HRVD memperlihatkan pengalaman dari 7.668 responden, tetapi kira-kira 940.000 orang Timor-Leste lainnya tidak memberikan kesaksian kepada Komisi. Meskipun begitu, bahkan jika HRVD dan RMS mencerminkan pengalaman setiap orang hidup di Timor-Leste, masih banyak orang meninggal yang belum didokumentasikan karena semua orang yang mungkin masih ingat akan kematian mereka sudah mati juga, meninggalkan Timor-Leste, atau sudah tidak mampu baik secara kejiwaan maupun fisik untuk mengulang cerita tersebut pada waktu pendataan diadakan. Di desa-desa tempat pembunuhan sangat banyak terjadi, ada kemungkinan tidak satu pun saksi yang masih selamat sampai 2002 – 2003. Keluarga-keluarga lain mungkin telah meninggalkan Timor samasekali, dengan membawa ingatan sosial mereka mengenai kematian itu. Ada juga keluarga yang memutuskan untuk tetap merahasiakan pengalaman masa lalu mereka, sehingga tidaklah mungkin mendokumentasikan secara langsung kematian yang pernah menimpa keluarga mereka. Ingatan sosial memang selalu tidak lengkap.

42. RMS menggunakan teknik standar survei rumahtangga yang didasarkan pada kematian yang dilaporkan untuk memperkirakan jumlah keseluruhan pembunuhan, mati karena kelaparan dan sakit, dan mati bertempur. Bagaimana pun, jumlah keseluruhan ini adalah perkiraan jumlah keseluruhan kematian yang *masih mungkin diingat oleh penduduk Timor-Leste masa kini*, yang merupakan himpunan bagian atau subset dari keseluruhan angka kematian yang sesungguhnya terjadi. Perbandingan kematian yang diingat menurut masa kini dengan seluruh jumlah kematian seluruhnya disebut angka cakupan (*coverage rate*).

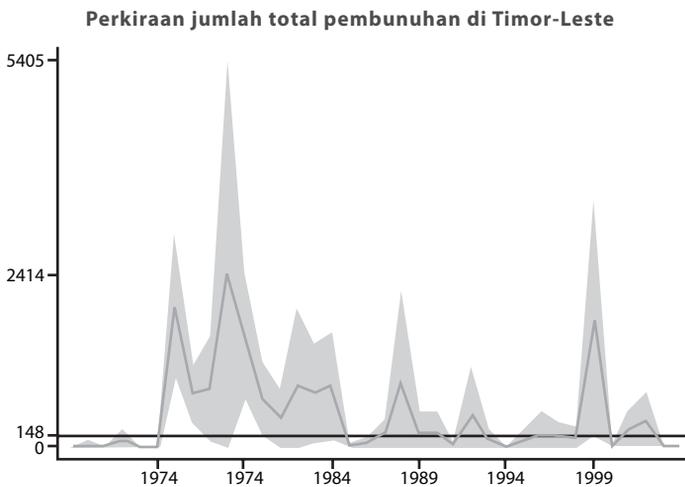
43. Metode alternatif untuk perkiraan jumlah keseluruhan kematian adalah dengan memakai *multiple systems estimation* (MSE). Metode ini dipakai untuk mengoreksi sensus dengan membandingkan cakupan antara berbagai proyek dokumentasi. Perkiraan MSE mengenai jumlah kematian karena kelaparan dan sakit dan karena pembunuhan disajikan dan diperbandingkan dengan estimasi RMS. Untuk pembunuhan, perkiraan MSE lebih sesuai, sementara untuk perkiraan seluruh jumlah kematian karena kelaparan dan sakit, perkiraan RMS lebih sesuai.*

.....
* MSE dipakai di mana-mana untuk memperkirakan penaksiran rendah (*under-reporting*) dalam hal sensus kependudukan. [Untuk contohnya, lihat J. G. Robinson, B. Ahmed, P. Das Gupta dan K. Woodrow, "Estimation of Population Coverage in the 1990 United States Census Based on Demographic Analysis", *Journal of the American Statistical Association*, 88 (423), 1992, hal. 1061-1071].

Perkiraan-perkiraan pembunuhan, kematian karena kelaparan dan sakit, dan pemindahan

Pembunuhan

44. Jumlah keseluruhan tahunan pembunuhan dapat diperkirakan dari RMS, dan hasilnya diperlihatkan di bawah ini pada Bagan. Bagan ini memperlihatkan tingkat yang relatif tinggi untuk pembunuhan pada periode 1975 – 1979, di samping peningkatan-peningkatan pada awal dasawarsa 1980 dan sebuah puncak lagi pada 1999. Keseluruhan pembunuhan yang diperkirakan melalui RMS adalah 16.000, dengan ambang kesalahan +/- 4.400. Perkiraan RMS untuk pembunuhan didasarkan hanya pada 235 pembunuhan yang dilaporkan. Akibatnya, kesalahannya cukup besar, seperti terlihat pada banyaknya tahun saat rentang kesalahan (*error bands*) menyentuh angka nol (*zero*). Untuk tahun-tahun ini, hipotesis bahwa jumlah kematian yang diperkirakan adalah nol tidak dapat ditolak. Selain itu, rentang kesalahan itu cukup lebar sehingga memungkinkan banyak pola tafsiran yang lain.



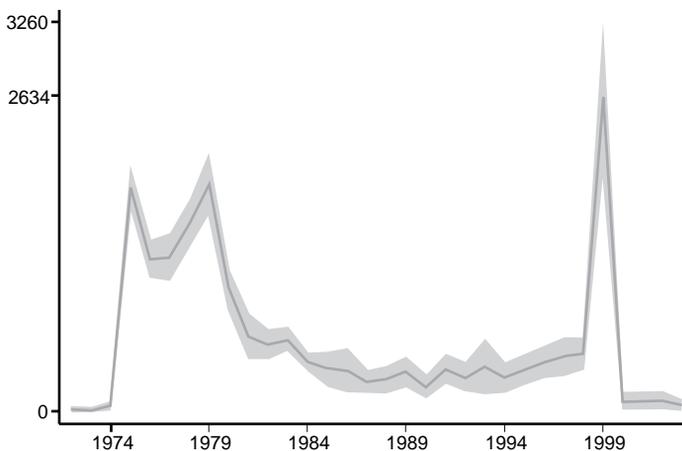
- Perkiraan kematian akibat deprivation: 16090 (+/-4426)

Sumber: Survei Tingkat Kematian Retrospektif yang dilaksanakan oleh CAVR

45. Seperti halnya kematian karena kelaparan dan sakit, juga dimungkinkan untuk memperkirakan jumlah keseluruhan tahunan pembunuhan dengan menggunakan *multiple systems estimation* (MSE). Untuk pembunuhan, kesaksian-kesaksian CAVR (disebut HRVD) mendokumentasikan hampir sepertiga dari keseluruhan pembunuhan yang diperkirakan, sedangkan seperti disebutkan di atas, hanya ada 235 pembunuhan yang didokumentasikan melalui RMS. Maka, MSE untuk

pembunuhan menggabungkan data GCD dan HRVD. Hasilnya diperlihatkan pada Bagan Perkiraan total pembunuhan di Timor-Leste. MSE memperkirakan, seluruhnya ada 18.600 pembunuhan (+/- 1.000). Sumbu vertikal memperlihatkan maksimum kesalahan (3.260) dan nilai perkiraan maksimum (2.634), keduanya muncul pada 1999. Pola lintas waktu kelihatan lebih jelas di MSE daripada di dalam perkiraan survei RMS: jumlah keseluruhan pembunuhan yang diperkirakan meningkat dari hampir nol (tidak ada pembunuhan) pada periode pra-invasi, lalu naik memuncak dua kali yaitu pada 1975 dan 1979. Sesudah itu pembunuhan merosot dan juga pada dasawarsa 1980 dan dasawarsa 1990. Garis memuncak pada 1999 menandakan titik tertinggi untuk pembunuhan yang diperkirakan, jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya.

Perkiraan total pembunuhan di Timor-Leste



- Perkiraan total pembunuhan 1975-1999: 18.571 (+/-982)

Sumber: MSE, dengan menggunakan HRVD + GCD, oleh CAVR

46. Perkiraan pembunuhan mengalami kekosongan yang penting dalam data: 1991 seharusnya mempunyai puncak kecil yang menunjukkan pembantaian di Santa Cruz, tetapi tidak cukup laporan yang diterima mengenai peristiwa tersebut sehingga perkiraan pembunuhan di tahun itu tidak bisa tepat. Perkiraan untuk 1991 sebenarnya sedikit lebih rendah dari perkiraan untuk 1990. Hal ini menggambarkan masalah yang dihadapi pada semua koleksi data berskala besar: pembunuhan merupakan peristiwa yang relatif jarang terjadi pada keseluruhan penduduk, sehingga sampel probabilitas tidaklah mungkin merangkum kejadian spesifik (misalnya, tidak adanya laporan mengenai Santa Cruz dalam RMS). Pada laporan kualitatif seperti HRVD, sumber-sumber investigasi harus dikhususkan untuk peristiwa-peristiwa spesifik; kalau tidak, tidak ada jaminan peristiwa itu terdokumentasi. Meskipun HRVD menerima lebih daripada 20 kematian yang dilaporkan untuk peristiwa tersebut, itu

hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhannya. Peristiwa-peristiwa yang lebih kecil dapat tercakup dengan lebih baik, sehingga perkiraan lintas waktu tidak secara teliti mencerminkan pentingnya 1991.*

47. Tidak seperti untuk kematian karena kelaparan dan sakit, pembunuhan sepertinya tidaklah mungkin ditaksir jauh terlalu rendah. Pertama, pembunuhan lebih jarang menimpa keseluruhan keluarga dibandingkan dengan kematian karena kelaparan dan sakit, sehingga lebih besar kemungkinan ada anggota keluarga yang selamat yang bisa melaporkan kejadian ini. Kedua, perbandingan antara pembunuhan yang didokumentasikan dengan seluruh pembunuhan yang diperkirakan (angka cakupan) adalah 0,637. Angka itu lebih tinggi daripada perbandingan antara kematian karena kelaparan dan sakit yang terdokumentasi dengan kematian karena kelaparan dan sakit yang diperkirakan (0,513). Angka cakupan yang tinggi untuk pembunuhan berarti bahwa MSE sendiri sebenarnya dapat lebih baik mengoreksi pembunuhan yang tidak dilaporkan dibandingkan dengan karena kelaparan dan sakit yang tidak dilaporkan. Selanjutnya, pembunuhan biasanya relatif jarang terjadi, dan karena itu tidaklah mungkin menggunakan analisis spekulatif yang menggunakan data sensus untuk menentukan angka pembunuhan, seperti yang sering dilakukan untuk menentukan angka kematian karena kelaparan dan sakit. Atas dasar ini, kami menemukan bahwa telah terjadi kurang lebih 18.600 pembunuhan, dengan ambang kesalahan +/- 1.000.

Kematian karena kelaparan dan sakit

48. Analisis jumlah keseluruhan kematian karena kelaparan dan sakit dimulai dengan analisis jumlah total kematian yang diperkirakan berdasarkan RMS, dan hasilnya disajikan di bawah pada Bagan Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste.† Kematian yang diperkirakan disajikan bersamaan dengan jumlah kematian yang diproyeksikan dari angka kematian karena kelaparan dan sakit 1972 – 1974 (dijelaskan di bawah). Jumlah kematian yang dikaitkan responden dengan “kelaparan atau penyakit” meningkat ke tingkat yang paling tinggi selama masa pasca-invasi, 1975 – 1980. Pada periode 1983 – 1998 jumlah perkiraan total berfluktuasi sekitar nilai median sebesar 3.632 perkiraan kematian tahunan. Jumlah total tahunan lambat laun meningkat selama dasawarsa 1990, dan mencapai puncak terakhirnya pada 1999.‡

* Ingat bahwa ambang kesalahan merepresentasikan “lubang” dalam data seperti ini. Maksudnya, kegiatan *sampling* itu memang hanya mencakup informasi sejumlah kecil dari keseluruhan peristiwa yang ada. Beberapa peristiwa besar mungkin jadi tidak tertera (seperti pembantaian di Santa Cruz). Tingkat kesalahan yang dihitung untuk perkiraan keseluruhan jumlah peristiwa dirancang untuk mencerminkan ketidakpastian jumlah keseluruhan yang diperkirakan, termasuk juga kenyataan bahwa peristiwa penting mungkin tidak dicatat.

† Data tersebut tidak mencukupi untuk perkiraan sistem-tiga tentang kematian karena lapar dan sakit.

‡ Seperti yang telah dibahas dalam subbab mengenai metodologi, kenaikan lamban kematian karena kelaparan dan sakit yang diperkirakan mulai dari awal dasawarsa 1980 sampai akhir dasawarsa 1990 adalah merupakan akibat kenaikan jumlah penduduk, dan juga karena berkurangnya jumlah kematian yang tidak dapat diingat lagi berhubung tidak adanya anggota keluarga lagi yang masih selamat pada 2004 ketika survei dilakukan.

49. Jumlah total kematian yang diperkirakan karena kelaparan dan sakit pada 1975 – 1999 adalah kira-kira 143.700, dengan ambang kesalahan kira-kira +/- 11.000.* Sebagian dari kasus kematian ini adalah kematian normal, dalam arti hal itu juga akan terjadi bila tidak ada konflik atau bahaya kelaparan. Untuk taksiran kematian yang bisa dikaitkan dengan konflik, kita harus menetapkan lebih dahulu berapa banyak kematian yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh kelaparan dan penyakit pada saat tidak ada konflik.

50. Tahun-tahun masa prapendudukan 1972 – 1974 merupakan masa damai, saat jumlah kasus kematian karena kelaparan dan sakit dapat dianggap wajar. Pertama, untuk menghitung data patokan awal jumlah penduduk, estimasi penduduk untuk 1971 – 2003 diinterpolasikan antara jumlah total yang dilaporkan dalam sensus Portugis 1970 (609.477) dan jumlah total dari sensus 2004 (924.642). Dari RMS, jumlah kematian karena kelaparan dan sakit selama 1972 – 1974 yang diperkirakan ada kurang-lebih 1.686 – 2.252. Angka kematian setiap tahunnya dihitung dengan cara membagi jumlah proyeksi penduduk tiap tahunnya dengan perkiraan RMS atas jumlah kematian tahun itu. Dengan cara itu, rata-rata angka kematian tahunan karena kelaparan dan sakit 1972 – 1974 dapat dihitung.

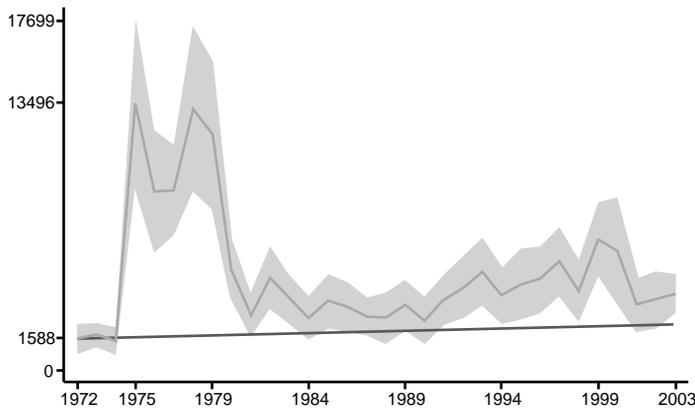
51. Perkiraan angka kematian (3,1 kematian per 1.000 orang) diterapkan terhadap penduduk yang diproyeksikan setiap tahunnya sampai dengan 2003.† Perkiraan angka-angka kematian ini membentuk data patokan awal (*baseline*) yang diperlihatkan pada Bagan Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste. Pengurangan perkiraan tahunan RMS dengan proyeksi jumlah kematian wajar pada masa damai menghasilkan adanya kelebihan sebanyak 84.200 kematian karena kelaparan dan sakit (+/- 11.000).‡ Jumlah kematian ini merupakan perkiraan berdasarkan RMS dari kematian yang melampaui jumlah total yang memang dapat diduga apabila angka kematian karena lapar dan sakit terus berlangsung seperti pada masa damai sebelum invasi.

* Jumlah total ambang kesalahan dihitung dengan menghitung akar kuadrat jumlah varian (*variances*) estimasi tahunan dan dikalikan dengan angka konvensional 1,96 untuk mendapatkan selang kepercayaan 95%.

† Angka patokan dasar ini (3,1 kematian per 1.000 orang) termasuk rendah: angka rata-rata wilayah di Asia Tenggara pada awal dasawarsa 1970 adalah 12-14 per 1.000. Lampiran metodologi menyebut bagaimana penaksiran lebih rendah ini bisa disesuaikan dengan menggunakan perkiraan berbasis sensus dari angka-kematian kasar (*crude death rate* - CDR). Bagaimanapun juga, penambahan dengan pengukuran berbasis sensus meminta banyak asumsi mengenai kualitas perkiraan CDR. Penemuan-penemuan inti yang disajikan di sini hanya didasarkan pada estimasi-estimasi sensus 1970 dan 2004 dan data yang dikumpulkan oleh Komisi.

‡ Ambang kesalahan jumlah kelebihan kematian dihitung dengan cara yang sama dengan ambang kesalahan jumlah total, termasuk kesalahan standar tahun-tahun yang mewakili jumlah kelebihan total.

Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste



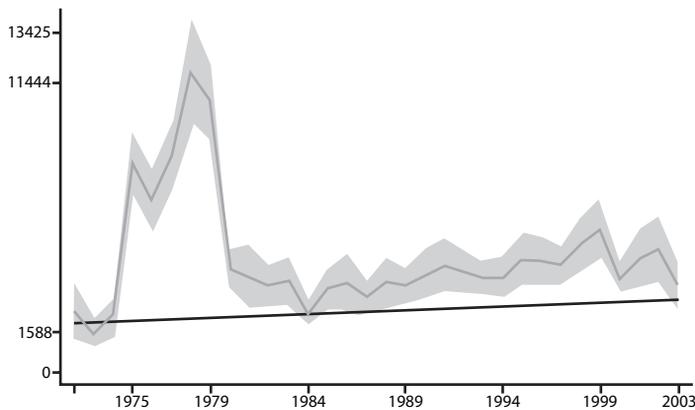
- Perkiraan kematian total akibat kelaparan/penyakit, 1972 - 2003: 161.098 (+/- 10.952)
 - Perkiraan kematian total akibat kelaparan/penyakit, 1975 - 1999: 135.017 (+/- 10.251)
 - Kelebihan jumlah kematian di atas data perkiraan awal (*baseline*), 1975 - 1999: 86.539 (+/- 10.251)
- Sumber: Survei Tingkat Kematian Retrospektif yang dilaksanakan oleh CAVR

52. Metode alternatif untuk mendapatkan perkiraan jumlah total untuk kelebihan kematian adalah menghitung suatu MSE sistem-dua dengan menggunakan RMS dan GCD. Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena dua alasan berikut. Pertama, jumlah kematian karena kelaparan dan sakit yang dilaporkan dalam RMS pada 1974 – 1999 (2.231) kecil kalau dibandingkan dengan jumlah total perkiraan untuk kematian karena kelaparan dan sakit berdasarkan RMS (143.700). Kedua, perkiraan sistem-dua dapat menyimpang akibat korelasi yang tidak terkontrol antara sistem-sistem tersebut.* Misal saja, jika orang yang mati itu cenderung tidak dikubur di perkuburan umum dan juga cenderung tidak diingat lagi oleh para responden survei, maka sistem dua akan menghasilkan korelasi positif. Ingat bahwa korelasi ini banyak terjadi pada tahun-tahun langsung setelah invasi, ketika banyak orang hidup dalam kondisi yang serba sulit, pertama-tama karena mereka harus selalu berpindah-pindah dan kemudian juga karena ditahan di kamp-kamp pemukiman. Kedua kondisi ini lebih mengarah ke bencana kematian besar-besaran dari keseluruhan kelompok dan juga ke situasi di mana hanya sedikit orang bisa terkubur di perkuburan umum dengan penanda kubur yang permanen. Korelasi positif antara GCD dan RMS pada tahun-tahun yang mencolok itu kemungkinan besar dapat sangat membiaskan estimasi sistem-dua ke arah menurun.

* Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, data itu tidak mencukupi model sistem-tiga kematian karena kelaparan dan sakit. Ada 5.101 kematian karena kelaparan dan sakit yang dilaporkan dalam HRVD, kira-kira dua kali lebih banyak daripada dalam RMS; namun begitu, jumlah itu adalah sebagian kecil dari jumlah total yang dapat diduga untuk kematian karena kelaparan dan sakit. RMS lebih disukai untuk dipakai daripada HRVD karena RMS dikumpulkan menurut sampel probabilitas. HRVD adalah sampel kemudahan, sehingga memakai HRVD bisa menimbulkan asumsi bahwa semua kematian setiap tahunnya mempunyai probabilitas yang sama untuk didokumentasikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat lampiran metodologi mengenai bagaimana MSE dihitung.

53. Perkiraan MSE ini diperlihatkan pada Bagan Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste. Jumlah total kematian karena kelaparan dan sakit yang diperkirakan dalam 1975 – 1999 adalah kira-kira 123.500 (+/- 5.200).^{*} Kelebihan kematian yang diperkirakan di atas jumlah dasar pada masa damai adalah 75.000 (+/-5.200). Perkiraan MSE ini lebih rendah dari perkiraan berdasarkan survei RMS, hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa ada korelasi positif antara RMS dan GCD. Nilai tengah (*median*) kematian karena kelaparan dan sakit pada tahun-tahun “normal” penduduk, 1983 – 1998, seperti yang diperkirakan melalui MSE (3.727) adalah sama dengan nilai yang ditemukan survei (3.632). Maksudnya yaitu, perkiraan survei RMS dan perkiraan MSE untuk tahun-tahun “normal” penduduk adalah sama, tetapi RMS menghasilkan perkiraan yang lebih tinggi untuk tahun-tahun yang luarbiasa. Kelihatannya pada tahun-tahun normal ada lebih sedikit kematian yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa bencana yang menghapuskan keseluruhan keluarga (yang menyebabkan survei mempunyai pelaporan yang lebih rendah), dan secara relatif juga lebih sedikit orang mati yang dikuburkan di luar perkuburan umum. Akibatnya, selama tahun-tahun normal, MSE dan survei RMS menghasilkan perkiraan yang sama. Selama tahun-tahun luarbiasa, kedua metode menaksir terlalu rendah (*underestimate*) jumlah total kematian karena kelaparan dan sakit, tetapi penaksiran rendah MSE menjadi lebih serius karena hanya sebagian kecil dari seluruh orang mati selama tahun-tahun luarbiasa yang dikuburkan di perkuburan umum.

Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste

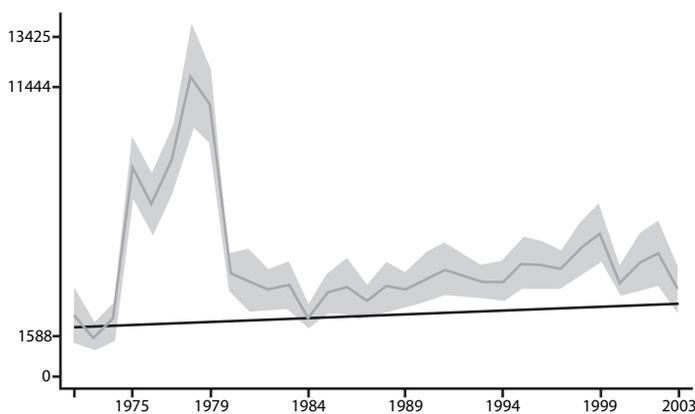


- Perkiraan kematian total akibat kelaparan/penyakit, 1972 - 2003: 146.232 (+/- 5.753)
 - Perkiraan kematian total akibat kelaparan/penyakit, 1975 - 1999: 123.529 (+/- 5.184)
 - Kelebihan jumlah kematian di atas data perkiraan awal (*baseline*), 1975 - 1999: 64.037 (+/- 5.184)
- Sumber: Perkiraan sistem ganda RMS - GCD, oleh CAVR

^{*} Untuk MSE, hanya korban mati bernama yang dilaporkan dalam RMS yang dimasukkan. Bobot sampling RMS tidak dipakai. GCD tidak memasukkan cara kematian, oleh sebab itu data dari GCD dialokasikan seperti yang disebutkan dalam lampiran metodologi.

54. Pola yang diperlihatkan dalam Bagan {gdepr_2mse_rmsgcd.pdf} mirip dengan perkiraan RMS, tetapi jumlahnya lebih rendah: ingat bahwa nilai maksimum yang diperkirakan pada Bagan {gdepr_2mse_rmsgcd.pdf} adalah 11.444 sedangkan dalam perkiraan RMS nilai itu adalah 13.496. Ada satu perbedaan dalam pola-pola lintas waktu: Jumlah-jumlah total yang diperkirakan MSE untuk 1975 lebih rendah daripada perkiraan-perkiraan untuk 1978 dan 1979, sebaliknya di dalam survei RMS perkiraan-perkiraan untuk ketiga tahun tersebut hampir sama. Dalam perkiraan RMS, rentang kesalahan (*error bands*) untuk ketiga tahun tersebut adalah besar kalau dibandingkan dengan perbedaan di antara tahun-tahun itu, dan oleh sebab itu, tidaklah bisa ditolak hipotesis bahwa jumlah total sebenarnya pada tahun-tahun itu adalah sama.

Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste



- Perkiraan kematian total akibat kelaparan/penyakit, 1972 - 2003: 146.232 (+/- 5.753)
 - Perkiraan kematian total akibat kelaparan/penyakit, 1975 - 1999: 123.529 (+/- 5.184)
 - Kelebihan jumlah kematian di atas data perkiraan awal (*baseline*), 1975 - 1999: 64.037 (+/- 5.184)
- Sumber: Perkiraan sistem ganda RMS - GCD, oleh CAVR

55. Perkiraan MSE menunjukkan bahwa kematian pada 1975 lebih sedikit daripada yang bisa dinyatakan dalam perkiraan RMS. Di luar perbedaan ini, perkiraan-perkiraan MSE dan RMS mirip dalam hal besarnya dan pola. Perlu ditegaskan bahwa kedua perkiraan ini mempunyai metodologi yang sangat berlainan: Penghitungan ukuran besarnya dalam RMS banyak mengandalkan bobot dalam survei, sementara kebanyakan data dalam MSE berasal dari batu nisan yang memiliki tanggal dalam setiap tahunnya dan dari pencocokan antara korban mati yang diidentifikasi melalui RMS dengan nama, tanggal, dan lokasi kubur tersebut.

56. Bila kita menggabungkan hasil dari kedua perkiraan ini, maka, kalau dihitung secara hati-hati dan sangat konservatif, jumlah kematian yang disebabkan karena kelaparan dan penyakit mencapai antara 75.000 dan 86.500 kasus di atas jumlah

kematian yang biasa terjadi pada masa damai. Perkiraan ini hanya dihitung berdasarkan sensus 1970 dan 2004 dan data-data dari Komisi. Perkiraan ini bisa dikatakan sebagai perkiraan jumlah total kematian karena kelaparan dan sakit yang masih mungkin diingat pada 2004. Hal ini merupakan pembatasan penting dalam penghitungan. Baik perkiraan RMS maupun perkiraan MSE sangat konservatif karena banyak kasus kematian tidak bisa diingat lagi pada 2004. Sebagian kasus kematian tidak meninggalkan sisa anggota keluarga lagi yang dapat melaporkan kasus kematian itu pada 2004, dan sebagian orang yang meninggal pada tahun-tahun sangat luarbiasa tersebut tidaklah dikuburkan di perkuburan umum. Maka tahun-tahun saat survei kelihatannya menghadapi masalah kasus-kasus hilangnya seluruh anggota keluarga juga merupakan tahun-tahun saat orang hampir tidak bisa dikuburkan di perkuburan umum. Korelasi positif antara data GCD dan RMS data menciptakan penaksiran lebih rendah (*underestimation*) dalam MSE.

57. Lampiran metodologi menyajikan sebuah model yang dapat menyesuaikan perkiraan RMS dan MSE untuk mengoreksi hilangnya pengetahuan mengenai kematian setelah beberapa waktu. Model ini memakai informasi sensus tambahan, termasuk angka kematian kasar (*crude death rates*) yang diperkirakan oleh pemerintah AS dan Indonesia. Apabila asumsi dalam pokok dasar data dan dalam model-model itu benar, maka jumlah total kematian karena kelaparan dan sakit bisa mencapai 103.000 di atas jumlah kasus yang biasa terjadi pada masa damai, dengan suatu kemungkinan (walaupun kecil) perkiraan yang paling tinggi, yaitu 183.300. Meskipun ada ketidakpastian dalam model ini, Komisi menyimpulkan bahwa selama periode 1975 – 1999, orang yang mati karena kelaparan dan sakit minimal ada 100.000 di atas jumlah kasus kematian yang biasa terjadi pada masa damai.

Pemindahan

58. Penemuan kunci dari analisis pemindahan diuraikan di bawah:

- Pemindahan terjadi secara luas: 55,5% rumahtangga yang disurvei melaporkan satu atau lebih peristiwa pemindahan, dengan jumlah total 2.011 peristiwa pemindahan yang dilaporkan antara 1974 dan 1999.^{*}
- Apabila diproyeksikan pada penduduk seluruhnya, survei menghasilkan 108.200 rumahtangga yang dipindahkan,[†] yang mengalami 282.800 peristiwa pemindahan[‡].
- Sebagian besar pemindahan terjadi secara lokal. Dari keseluruhan peristiwa pemindahan, 54,3% terjadi di satu kecamatan; 15,6% terjadi di kabupaten; 17,4% terjadi di wilayah; 9,3% terjadi di Timor-Leste; dan 2,4% terjadi di luar

* Menurut sensus 1990, ada kurang lebih 4,5 orang per rumahtangga pada tahun itu. Bagan memperlihatkan kenaikan sampai 4,75 orang per rumahtangga (924.642/194.943) pada sensus 2004. Selang kepercayaannya adalah 51,8%-59,2% rumahtangga.

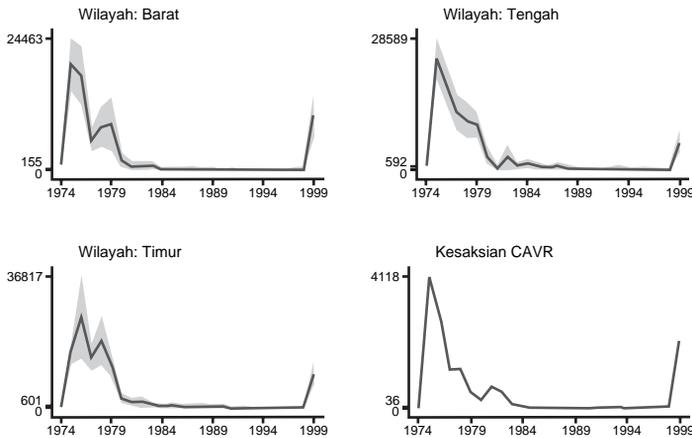
† Selang kepercayaannya adalah 101.013-115.412 rumahtangga.

‡ Selang kepercayaannya adalah 251.631 – 313.990 peristiwa.

Timor-Leste.[†] Bagaimanapun, pada 1999, pemindahan yang memindahkan rumahtangga keluar Timor-Leste naik mencapai 9,3% (+/-6,1%) dari seluruh pemindahan pada tahun itu.

- Banyak pemindahan terjadi berturut-turut dalam waktu yang cepat: 22,2% dari peristiwa pemindahan berlangsung dalam waktu satu bulan atau kurang, dan 50,1% berlangsung dalam waktu satu tahun atau kurang. Akan tetapi, pemindahan lainnya berlangsung dalam waktu panjang, sehingga rata-rata periode pemindahan adalah 46,7 bulan.[†] Puluhan ribu rumahtangga mengatakan mereka dipindah-pindahkan dari masa pasca-invasi 1975q4 (kuartal ke-4 1975) terus-menerus sampai 1999q4 (kuartal ke-4 1999). [Lihat Bagan Jumlah total rumahtangga yang terpindahkan di Timor-Leste berdasarkan daerah pada paragraf 60 untuk analisis lebih lanjut.]
- Badan yang dilaporkan penduduk sebagai kelompok yang paling sering menyuruh mereka pindah adalah Militer Indonesia (46,4%), diikuti oleh Fretilin/Falintil (15,0%) dan kelompok milisi (8,8%).[‡] Responden melaporkan bahwa “konflik” merupakan motivasi dari 52,3% keseluruhan pemindahan mereka, dengan tambahan 16,3%. “dipaksa oleh Militer Indonesia”.
- Sebagian besar pemindahan terjadi antara 1975 – 1980. Tahun maksimumnya adalah 1975 dan 1976, dengan 61.400 (+/- 13.300) dan 59.800 (+/- 7.200) peristiwa pemindahan secara beruntun. Jumlah peristiwa pemindahan pada 1999 jauh lebih sedikit yaitu kira-kira 28.100 (+/- 5.600) peristiwa.

Perkiraan peristiwa pemindahan di Timor-Leste (dengan rentang kesalahan)



Sumber: Survei Kematian Retrospektif (RMS), CAVR

Catatan: Terhitung satu pemindahan per rumahtangga per tahun

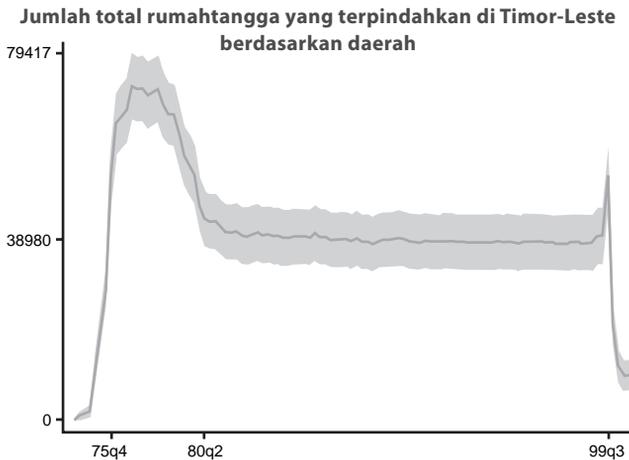
* Ambang kesalahannya adalah +/- 10,4% untuk pemindahan di dalam kecamatan, dan 4,6% atau kurang perkiraan lainnya. Penemuan ini mungkin dibatasi oleh pembatasan karena orang-orang yang berada di kamp pengungsian di Timor Barat tidak turut diwawancarai.

† Selang kepercayaan adalah 41-52 bulan.

‡ Ambang kesalahan adalah +/- 4,2%.

59. Bagan di atas (Perkiraan peristiwa pemindahan di Timor-Leste [dengan rentang kesalahan]) memperlihatkan jumlah peristiwa pemindahan menurut tahunnya pada tiga daerah di Timor-Leste, dan juga jumlah total peristiwa pemindahan yang dilaporkan kepada Komisi dalam kesaksian kualitatif. Sumbu vertikal memperlihatkan nilai maksimum (pada titik puncak rentang kesalahan) untuk tiap daerah. Bagan Jumlah total rumahtangga yang terpindahkan di Timor-Leste berdasarkan daerah memperlihatkan 1975 dan 1976 sebagai puncak tahun terjadinya pemindahan, dengan 1977 – 1979 dan 1999 pada tingkat yang lebih rendah dan kurang lebih sama. Komisi mencatat bahwa 1975 dan 1976 secara statistik tidak bisa saling dibedakan dalam perkiraan regionalnya. Dalam bahasa formalnya, tidak mungkin untuk sepenuhnya menolak hipotesis bahwa tahun-tahun ini mempunyai jumlah peristiwa pemindahan yang sepadan. Wilayah Barat dan Tengah memperlihatkan penurunan dari puncak-puncak pada 1975 – 1976 ke tingkat yang lebih rendah pada 1979; penurunannya adalah ke arah nol (*zero*). Sebaliknya, wilayah Timur memperlihatkan pada 1979 tingkat pemindahannya hampir sama dengan intensitas pemindahan pada waktu memasuki masa pascainvasi.

60. Cara lain untuk memandang kasus pemindahan adalah dengan menetapkan berapa banyak rumahtangga yang dipindahkan pada setiap periode. Bagan Perkiraan Peristiwa Pemindahan di Timor-Leste (dengan rentang kesalahan) memperlihatkan ada berapa rumahtangga yang dipaksa pindah setiap tahunnya. Bagan Jumlah total rumahtangga yang terpindahkan di Timor-Leste berdasarkan daerah memperlihatkan ada berapa rumahtangga yang dipaksa tinggal di suatu tempat yang tidak mereka anggap sebagai rumah mereka pada setiap tahunnya. Bagan Perkiraan peristiwa pemindahan di Timor-Leste (dengan rentang kesalahan) memperlihatkan ada berapa “peristiwa pemindahan” yang diderita setiap periodenya, sementara Bagan Jumlah total rumahtangga yang terpindahkan di Timor-Leste berdasarkan daerah memperlihatkan ada berapa rumahtangga dalam status “pemindahan” dalam setiap periode. Sumbu vertikal memperlihatkan nilai maksimum pada puncak pita kesalahan dan nilai median dari kuartal ketiga 1980 (1980q3) sampai ke kuartal kedua 1999 (1999q2).



Sumber: Survei Kematian Retrospektif (Modul Pemindahan), oleh CAVR

61. Penduduk dipindah-pindahkan pada akhir 1975 dan awal 1976, dan mereka tidak bisa pulang ke rumah mereka untuk waktu yang lama. Pemindehan lainnya terus berlangsung pada 1977, dan lebih banyak lagi pada 1978, dan orang-orang yang lebih dahulu diungsikan masih tetap tidak bisa pulang ke rumah mereka. Baru pada 1979 sajalah sejumlah besar rumahtangga menetap di tempat-tempat yang mereka anggap “rumah”. Dalam tiap tahun antara 1980 sampai 1999, kira-kira 39.000 rumahtangga tetap menganggap diri mereka dipindahkan. Sejumlah 15.000 rumahtangga lagi dipindahkan pada kuartal ketiga 1999. Akan tetapi, pada kuartal keempat, ada lebih dari 32.500 rumahtangga yang pulang ke rumah mereka, dan jumlah rumahtangga yang diperkirakan tetap dipindahkan merosot sampai ke kurang-lebih 20.400, kemudian turun lagi ke 11.700 pada kuartal pertama 2000, dan ke 9.600 pada kuartal kedua 2000.

Analisis statistik deskriptif mengenai pelanggaran fatal yang dilaporkan pada Komisi

62. Bagian ini menjelaskan pola pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi dalam pernyataan naratif (HRVD). Ukuran dan pola yang dibebankan di sini tidak mewakili ukuran jumlah total dan keseluruhan pola pembunuhan dan penghilangan. Bagian ini lebih mengemukakan analisis mengenai pola dan kecenderungan pembunuhan dan penghilangan yang telah diketahui melalui pernyataan kualitatif Komisi.*

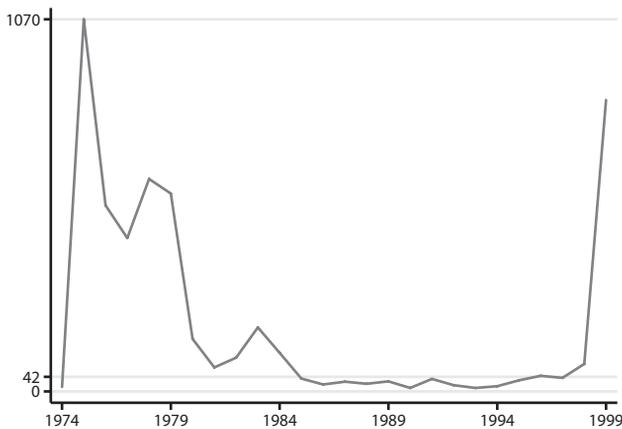
Pola lintas waktu pembunuhan dan penghilangan para non-petempur yang dilaporkan

63. Pola pembunuhan dan penghilangan banyak bervariasi dalam lintas waktu. Seperti yang dapat dilihat pada Bagan Jumlah Kejadian Pembunuhan Penduduk Sipil yang Dilaporkan, 1974 – 1999, 67,4% (3.451/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan terpusat pada periode 1975 – 1981. 16,4% (838/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan terjadi pada 1999 sebelum, selama, dan sesudah Jajak Pendapat yang dikelola oleh PBB. Jumlah tertinggi pembunuhan yang dilaporkan kepada Komisi adalah pada masa invasi militer Indonesia dan pada tahun-tahun awal pendudukan. Meski tahun yang menunjukkan jumlah pembunuhan tertinggi terhadap para non-petempur yang dilaporkan adalah 1975, sifat terbuka dari proses pengambilan pernyataan itu sedemikian rupa sehingga ada banyak sekali ketidaktepatan tanggal yang ditemukan dalam pernyataan yang melaporkan pembunuhan pada pertengahan dan akhir dasawarsa 1970.† Oleh sebab itu ada kemungkinan sebagian pembunuhan terhadap non-petempur yang dilaporkan terjadi pada 1975 bisa saja sebenarnya terjadi pada 1976 atau 1977.

* Lihat bagian di bawah untuk pembahasan terperinci mengenai sifat dan pembatasan data yang dikumpulkan melalui proses pengambilan pernyataan oleh Komisi.

† Lihat Lampiran Metode Statistik untuk keterangan yang lebih terperinci mengenai ketidaktepatan tanggal dalam proses pengambilan pernyataan.

Jumlah kejadian pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

64. Jumlah orang hilang yang dilaporkan kepada Komisi jauh lebih rendah daripada pembunuhan terhadap para non-petempur yang dilaporkan: ada 5.120 pembunuhan para non-petempur yang dilaporkan kepada Komisi, tetapi hanya ada 835 penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi. Selanjutnya, pola penghilangan yang dilaporkan sangat berbeda dari pembunuhan terhadap para non-petempur, seperti yang dapat dilihat pada Bagan Jumlah Kejadian Penghilangan yang Dilaporkan, 1974 - 1999. Ternyata, sejumlah besar pembunuhan para non-petempur banyak terjadi pada masa-masa awal tahun invasi, sementara sejumlah besar penghilangan terutama terjadi menjelang akhir masa-masa awal invasi pada 1979 dan 1983 - 1984, tidak lama sebelum dimulainya periode 'normalisasi dan konsolidasi' pendudukan Indonesia: 40,0% (332/835) dari orang hilang yang dilaporkan kepada Komisi terjadi pada 1979, 1983, ataupun 1984. Pola mengenai penghilangan dan pembunuhan para non-petempur yang dilaporkan sesuai dengan hipotesis bahwa kedua gejala pelanggaran itu digerakkan oleh kebijakan atau perbuatan yang berbeda yang diambil oleh mereka yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Khususnya, penghilangan digunakan dengan cara yang lebih bersasaran sebagai alat militer Indonesia untuk menumpas Resistansi.

Jumlah kejadian penghilangan yang dilaporkan, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

65. 20,9% (1.070/5.120) pembunuhan yang didokumentasikan dari proses pengambilan pernyataan Komisi terjadi pada 1975. Seperti terlihat pada Tabel Penghitungan Kejadian Pembunuhan Penduduk Sipil, 1975, dari seluruh pembunuhan pada 1975 yang didokumentasikan, 26,5% (283/1.070) tidak mempunyai informasi mengenai bulan saat pembunuhan itu terjadi. Akan tetapi, 19,5% (348/1.070) dari pembunuhan ini terjadi pada waktu konflik internal antarpertai dan pada waktu serangan lintas-batas Indonesia yang pertama kali, sementara 32,7% (350/1.070) terjadi pada Desember pada waktu diadakannya invasi besar-besaran militer Indonesia di Timor-Leste.

Tabel 1: Penghitungan kejadian pembunuhan penduduk sipil, 1975

| Tahun | Frekuensi | % |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Januari | 4 | 0.4 |
| Februari | 6 | 0.6 |
| Maret | 6 | 0.6 |
| April | 20 | 1.9 |
| Mei | 3 | 0.3 |
| Juni | 3 | 0.3 |
| Juli | 6 | 0.6 |
| Agustus | 194 | 18.1 |
| September | 154 | 14.4 |
| Oktober | 30 | 2.8 |
| November | 11 | 1 |
| Desember | 350 | 32.7 |
| Tak dilaporkan | 283 | 26.5 |
| Total | 1070 | 100 |

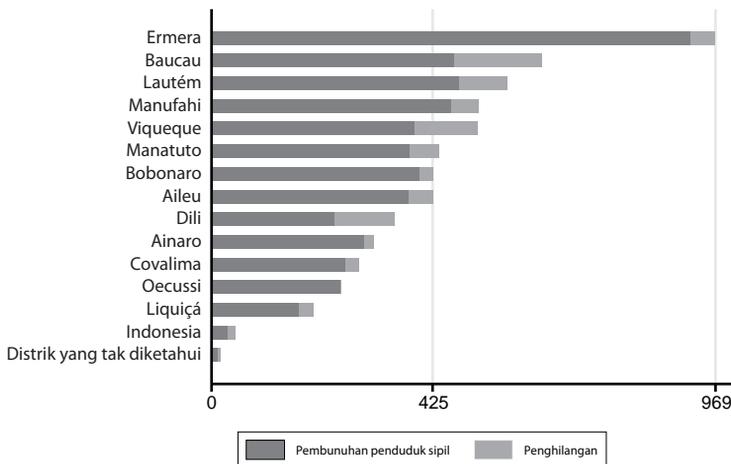
66. Sangatlah menarik bahwa hanya 3,8% (41/1.070) dari pembunuhan yang didokumentasikan pada 1975 terjadi pada Oktober dan November. Jadi, data dari proses pengambilan pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa pembunuhan dalam skala besar terjadi pada waktu konflik internal antarpantai pada Agustus dan September, kemudian ada masa yang relatif tenang dalam hal pembunuhan, hingga kemudian terjadi lagi pembunuhan berskala besar pada Desember pada masa invasi militer Indonesia ke Timor-Leste.

Pola lintas-ruang pembunuhan dan penghilangan dari para non-petempur yang dilaporkan

67. Data yang didasarkan pada sampel nonacak (seperti data ini) tidak bisa dipakai untuk mengkaji secara langsung perbedaan ukuran besarnya pelanggaran antara wilayah dan distrik. Data yang seperti itu hanya dapat mewakili cakupan total pelanggaran dari wilayah ke wilayah sejauh para deponen yang memberi pernyataannya mewakili penduduk lokal di mana mereka tinggal dan dipilih sesuai dengan proporsi kekerasan yang terjadi di masing-masing distrik.

68. Bagan Penghitungan Pelanggaran yang Dilaporkan, Berdasarkan Jenis dan Distrik memperlihatkan jumlah pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan menurut distrik di mana kekerasan itu terjadi, sebagaimana yang dilaporkan dalam proses pengambilan pernyataan Komisi. Ermera mempunyai lebih banyak pembunuhan yang dilaporkan daripada distrik lainnya, berkisar 18% (920/5120) dari keseluruhan pembunuhan yang dilaporkan. Secara relatif hanya sedikit pembunuhan para non-petempur di Indonesia, Dili, dan Liquiçá yang dilaporkan kepada Komisi.

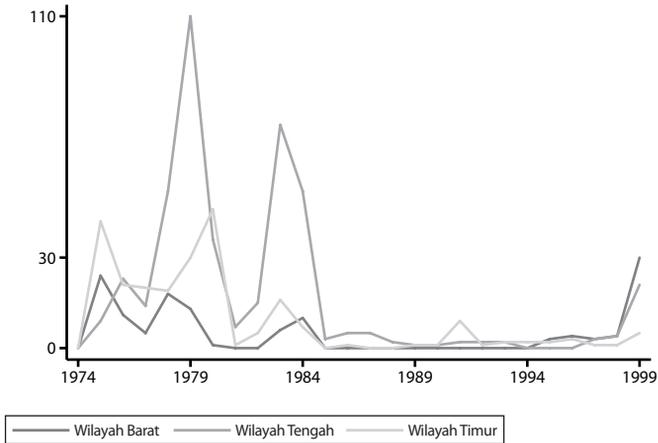
Penghitungan pelanggaran yang dilaporkan, berdasarkan jenis dan distrik



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

69. Bagan Jumlah Penghilangan Berdasarkan Wilayah Secara Lintas-Waktu, 1974 – 1999 memperlihatkan bahwa kasus penghilangan yang dilaporkan terutama terpusat di distrik-distrik Timur dan Tengah: Khususnya untuk penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi, 20,2% (169/835) terjadi di Baucau, 14,7% (123/835) di Viqueque, 13,9% (116/835) di Dili, dan 11,4% (95/835) di Lautém.

Jumlah penghilangan berdasarkan wilayah secara lintas-waktu, 1974-1999

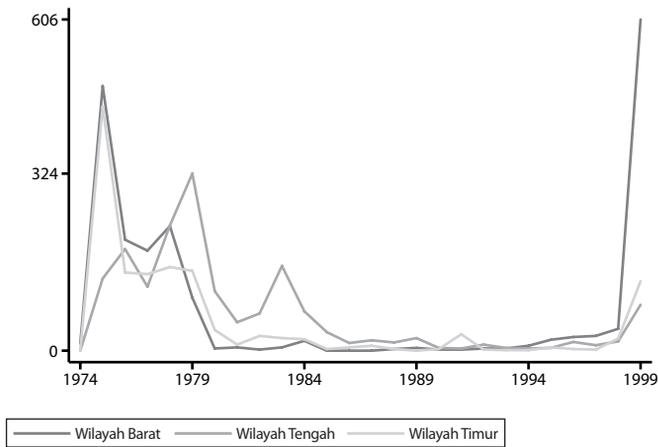


Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Pola lintas-waktu dan lintas-ruang pembunuhan dan penghilangan para non-petempur yang dilaporkan

70. Seperti yang diperlihatkan pada Bagan Jumlah Pembunuhan Penduduk Sipil Secara Lintas-Waktu, 1974 – 1999, pembunuhan yang dilaporkan mulai terjadi di Wilayah Barat dan Tengah pada waktu awal invasi pasukan Indonesia. Kemudian antara 1978 dan 1981, pembunuhan terhadap para non-petempur terjadi di Wilayah Timur dan Tengah, dan hanya ada sedikit pembunuhan terhadap para non-petempur yang dilaporkan yang terjadi di Wilayah Barat. Pada 1999, 72,3% dari pembunuhan terhadap para non-petempur yang dilaporkan terjadi di Wilayah Barat. Data pernyataan naratif Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa antara 1975 dan 1984, pembunuhan besar-besaran para non-petempur mengikuti gerakan lintas waktu dan lintas ruang serbuan militer Indonesia.

Jumlah pembunuhan penduduk secara lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

71. Pola penghilangan lintas waktu dan lintas ruang yang dilaporkan terlihat jelas berbeda dengan pola pembunuhan non-petempur, seperti yang dapat dilihat pada Bagan Jumlah Penghilangan Berdasarkan Wilayah Secara Lintas-Waktu, 1974 – 1999. Meskipun beberapa kasus orang hilang dilaporkan sekitar waktu invasi Indonesia dan kemudian juga pada 1999, kasus penghilangan—lain halnya dengan kasus pembunuhan para non-petempur—tidak diasosiasikan dengan munculnya operasi militer besar-besaran. Lebih tepatnya lagi, dua periode penghilangan besar-besaran dilaporkan: periode pertama terjadi pada 1978 sampai 1980, setelah serangan utama militer terhadap gerakan Resistansi selesai, dan periode kedua dari 1983 sampai 1984 setelah adanya perpecahan dalam gencatan senjata antara pasukan Indonesia dan Falintil. Pada waktu periode pertama penghilangan besar-besaran, 60,2% (198/329) dari kasus orang hilang yang dilaporkan terpusat di Wilayah Timur, 25,9% (95/329) terjadi di Wilayah Tengah, dan 10,0% (33/329) di wilayah Barat dan Indonesia. Pada waktu periode kedua penghilangan besar-besaran yang terjadi antara 1983 dan 1984, 72,0% (126/175) terjadi di Wilayah Timur, 13,1% (23/175) di Wilayah Tengah, dan 13,1% (23/175) di Indonesia dan di Wilayah Barat. Data tentang kasus penghilangan ini sesuai dengan hipotesis bahwa kasus penghilangan terutama digunakan di distrik-distrik Timur sebagai alat operasi balasan terhadap orang-orang yang dicurigai menjadi anggota atau yang diasosiasikan dengan kelompok Gerakan Resistansi.

Pola pembunuhan dan penghilangan dari para non-petempur yang dilaporkan menurut pertanggungjawaban institusional yang terkait

72. Sejumlah lembaga yang berbeda-beda terlibat dalam tindakan pembunuhan dan penghilangan selama masa terjadinya konflik. Kelompok lembaga utama adalah militer Indonesia, Falintil, partai politik Timor-Leste (seperti Fretilin, UDT, dan Apodeti), anggota-anggota pasukan pertahanan Timor-Leste di bawah pemerintahan Indonesia (seperti Hansip, Wanra, dan Ratih), milisi-milisi dan pasukan pembantunya lainnya (di bawah pemerintahan Indonesia.) Bagian ini mengulas tingkat pertanggungjawaban terhadap pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan pada waktu proses pengambilan pernyataan Komisi.

73. Kebanyakan dari pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi dikaitkan dengan militer Indonesia dan pasukan pembantu mereka, seperti yang diperlihatkan tabel di bawah ini: 57,6% (2.947/5.120) dari pelaku yang terlibat pelanggaran fatal dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi, dan 32,3% (1.654/5.120) dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka (seperti milisi, pasukan pertahanan sipil, dan pejabat lokal yang bekerja di bawah administrasi Indonesia). Dalam 29,6% (1.514/5.120) dari pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan, pelaku yang bertanggung jawab dikaitkan dengan Gerakan Resistansi dan pasukan prokemerdekaan.

Tabel 2: Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan

| Jenis Pelanggaran | Militer Indonesia | Kolaborator Timor-Leste TNI | Kelompok Resistansi | Lain-lain | Penduduk Sipil | Kelompok Pro-Otonomi | Tak Diketahui | Total |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------------|---------------|-------|
| Pembunuhan Penduduk Sipil | 2947 | 1654 | 1514 | 1341 | 214 | 81 | 708 | 5109 |
| Penghilangan | 642 | 245 | 80 | 72 | 21 | 2 | 111 | 833 |
| | 3589 | 1899 | 1594 | 1413 | 235 | 83 | 819 | 5942 |

74. Tingkat pertanggungjawaban lembaga yang terkait terhadap pembunuhan dan penghilangan yang dicatat, berbeda-beda selama terjadinya konflik. Pada masa awal invasi Indonesia antara 1975 dan 1984, 62,3% (2.831/4.543) dari pembunuhan dan penghilangan yang dicatat dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi. Kemudian, selama periode 'normalisasi dan konsolidasi' pendudukan Indonesia, antara 1985 dan 1998, 64,6% (317/488) dari pembunuhan dan penghilangan yang dicatat dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi. Kemudian, pada 1999 menjelang dan setelah Jajak Pendapat yang disponsori PBB, ada perubahan struktural yang tampak

kelas dalam pertanggungjawaban secara proporsional terhadap pelanggaran yang dicatat. Khususnya, 9,5% (85/898) dari pembunuhan dan penghilangan dikaitkan hanya dengan tindakan militer Indonesia dan polisi, 39,5% (355/898) dikaitkan dengan tindakan militer Indonesia dan polisi bersama-sama dengan milisi-milisi Timor-Timur, dan 42,9% (385/898) dikaitkan hanya dengan tindakan mandiri milisi Timor-Timur.

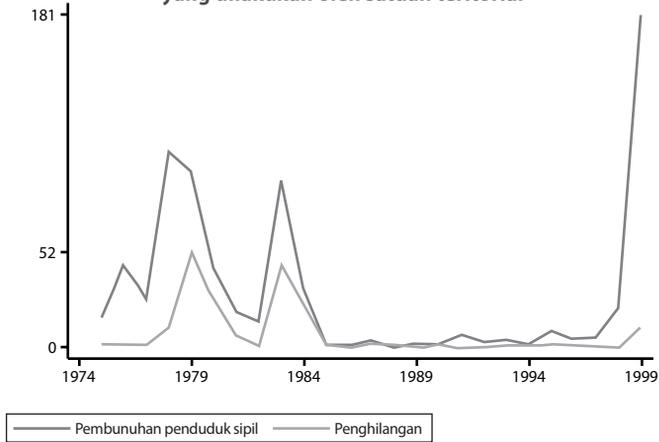
75. Sebaliknya, sementara pada 1975 ada 49,0% (561/1.145) pembunuhan dan penghilangan yang tercatat dikaitkan dengan Fretilin, pada 1976 hanya 16,6% (563/3.398) dari pembunuhan dan penghilangan dikaitkan dengan Fretilin.* Selanjutnya, 3,7% (18/488) dari pembunuhan dan penghilangan antara 1985 dan 1998 dikaitkan dengan Fretilin dan kemudian pada 1999 hanya 0,6% (5/898) dari pembunuhan dan penghilangan dikaitkan dengan Fretilin. Data pernyataan naratif Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa sebagian besar pembunuhan dan penghilangan yang dikaitkan dengan Fretilin dilaksanakan 1975 pada waktu konflik internal antarpantai politik.

76. Selama berbagai peristiwa yang terjadi pada masa konflik, para deponen dalam proses pengambilan pernyataan Komisi banyak menerakan pertanggungjawaban terhadap berbagai satuan khusus pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka pada waktu-waktu tertentu dalam masa konflik.

77. Seperti yang diperlihatkan oleh Bagan Pelanggaran Fatal Secara Lintas-Waktu, 1974 – 1999, yang Dilakukan oleh Satuan Teritorial dan Bagan Pelanggaran Fatal Secara Lintas-Waktu, 1974 – 1999, yang Dilakukan oleh Satuan Nonteritorial, pola pelanggaran yang dilaporkan dikaitkan dengan satuan teritorial (satuan yang berada di dalam struktur permanen militer lokal) dan satuan nonteritorial (satuan yang mendapat izin sementara untuk berperang dan melaksanakan tugas-tugas lainnya di Timor-Leste) dari militer Indonesia adalah hampir sama. Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan yang terkait baik dengan satuan teritorial maupun satuan nonteritorial sangat terpusat pada tahun-tahun 1975 – 1980, kemudian 1982 – 1984, dan akhirnya pada 1999. Data pernyataan naratif Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa satuan teritorial dan satuan nonteritorial militer Indonesia melaksanakan pembunuhan dan penghilangan dalam skala besar pada awal tahun-tahun pendudukan, pada awal dimulainya tahap konsolidasi masa pendudukan dan kemudian juga sekitar waktu diadakan Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB pada 1999.

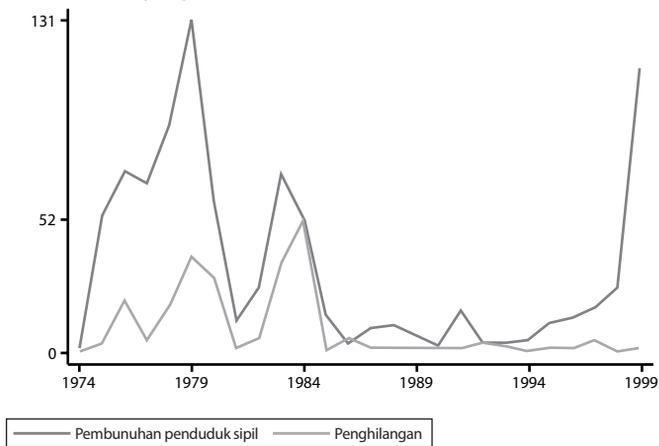
* Perhatikan bahwa 42,2% (237/561) dari pembunuhan dan penghilangan yang tercatat yang dikaitkan dengan Fretilin pada 1975 terjadi pada waktu konflik internal antarpantai pada Agustus dan September pada tahun tersebut dan bahwa 4,8% (27/561) dari pembunuhan dan penghilangan yang tercatat yang dikaitkan dengan Fretilin pada 1975 terjadi pada Desember, namun 43,3% (243/561) dari pembunuhan dan penghilangan pada 1975 yang dikaitkan dengan Fretilin tidak mempunyai informasi khusus mengenai bulan waktu pelanggaran itu terjadi.

Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974-1999, yang dilakukan oleh satuan teritorial



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

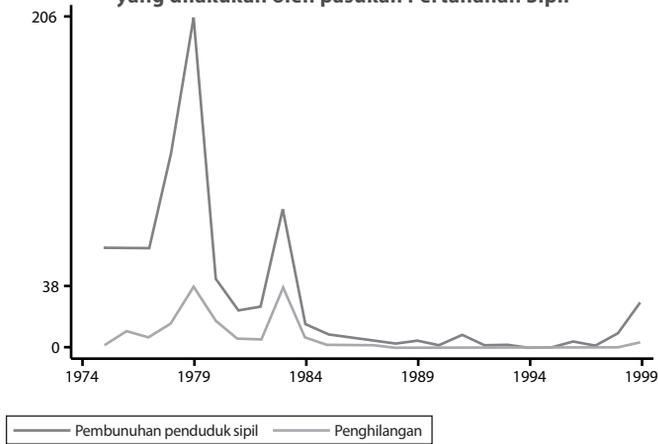
Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974-1999, yang dilakukan oleh satuan nonteritorial



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

78. Kasus pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan yang dikaitkan dengan pasukan pertahanan sipil, terutama Hansip, terpusat pada waktu tahun-tahun awal masa pendudukan antara 1975 dan 1979 dan kemudian juga 1983.

**Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974-1999,
yang dilakukan oleh pasukan Pertahanan Sipil**



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

79. Sebaliknya, kasus pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan yang dikaitkan dengan Pasukan Khusus (Kopassandha/Kopassus) terpusat pada 1978 dan 1980, 1982 dan 1984, 1991, dan kemudian juga 1999. Oleh sebab itu data pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa Kopassandha/Kopassus digunakan untuk operasi militer khusus pada tahun-tahun belakangan di periode awal invasi, dan kemudian digunakan untuk kampanye militer dalam tahun-tahun konsolidasi dan terakhir pada 1999.

80. Kadang-kadang pelanggaran fatal hanya dikaitkan dengan tindakan mandiri militer Indonesia dan polisi, di waktu lain dengan tindakan mandiri pasukan pembantu mereka, dan di lain waktu lagi dengan tindakan bersama militer Indonesia dan polisi dengan pasukan pembantu mereka. Pola pertanggungjawaban institusional bersama antara pasukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka dan pertanggungjawaban institusional mandiri berbeda-beda dalam lintas waktu, seperti yang bisa dilihat pada Tabel Persentase Pertanggungjawaban atas Pembunuhan yang Dilaporkan, Berdasarkan Periode, 1975 – 1999. Pada waktu tahun-tahun awal invasi dan kemudian berturut-turut pada tahun-tahun konsolidasi pendudukan, sekitar 45% dari pembunuhan yang dilaporkan hanya semata-mata dikaitkan dsengan militer Indonesia dan polisi. Pada sekitar waktu diadakannya Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB, 8,5% (71/838) dari pembunuhan yang dilaporkan hanya semata-mata dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi. Semakin lama pendudukan Indonesia berlangsung, semakin tinggi proporsi pembunuhan yang dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi yang bertindak bersama-sama pasukan pembantu mereka. Oleh sebab itu, data pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa selama masa awal tahun-tahun invasi dan tahun-tahun “normalisasi dan konsolidasi”, militer Indonesia

secara luas bertindak semata-mata sendiri dalam melaksanakan pembunuhan terhadap penduduk sipil, sedangkan, di 1999 militer Indonesia membantu dan bersekongkol dengan pasukan pembantu mereka (terutama milisi yang pro-otonomi) dalam melaksanakan pembunuhan masyarakat sipil.

Tabel 3: Persentase pertanggungjawaban atas pembunuhan yang dilaporkan, berdasarkan periode, 1975 – 1999

| Lembaga | 1975-1984 | 1985-1998 | 1999 | Total (1975- 1999) |
|--|-----------|-----------|------|--------------------|
| Militer dan Polisi Indonesia saja | 46,3 | 43,3 | 8,5 | 39,9 |
| Militer dan Polisi Indonesia beserta pasukan pembantu Timor-Leste | 12,7 | 18,8 | 41,4 | 18 |
| Pasukan Pembantu Timor-Leste saja | 9,1 | 7,4 | 42,5 | 14,5 |
| Lain-lain | 31,8 | 30,5 | 7,6 | 27,7 |
| Total (Hitungan Frekuensi Pembunuhan) | 3838 | 420 | 838 | 5096 |

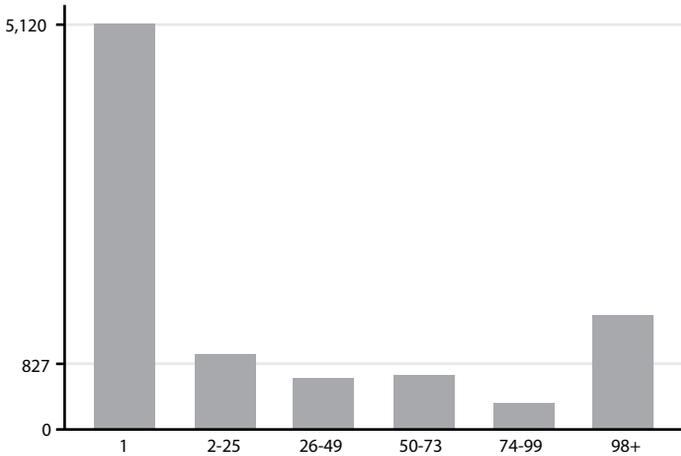
Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang diberikan kepada CAVR

Pola kasus pembunuhan dan penghilangan non-petempur yang dilaporkan terhadap korban perorangan dan kelompok

81. Beberapa kasus pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi dilakukan terhadap perorangan, tapi ada juga yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Bagan Jumlah Korban Pembunuhan Penduduk Sipil berdasarkan Ukuran Kelompok, 1974 – 1999 dan Bagan Jumlah Korban Tindakan Penghilangan berdasarkan Ukuran Kelompok, 1974 – 1999 memperlihatkan distribusi pelanggaran menurut ukuran kelompok korban kasus pembunuhan dan penghilangan.*

* Seperti dalam kasus pelanggaran yang dilaporkan terhadap korban perorangan, pelanggaran terhadap korban dalam kelompok bisa dilaporkan oleh lebih dari satu deponen. Data korban kelompok telah dibanding-bandingkan untuk mengecek pengidentifikasian laporan duplikat dari pelanggaran dan korban yang sama dalam pernyataan jamak. Metode yang digunakan untuk pengecekan dijelaskan pada Lampiran mengenai statistik.

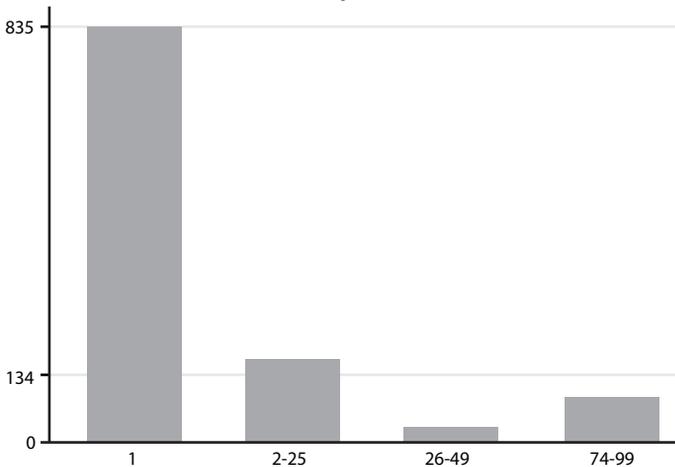
Jumlah korban pembunuhan penduduk sipil berdasarkan ukuran kelompok, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Bagan ini menunjukkan hitungan korban individual dalam kelompok dengan ukuran tertentu

Jumlah korban tindakan penghilangan berdasarkan ukuran kelompok, 1974-1999



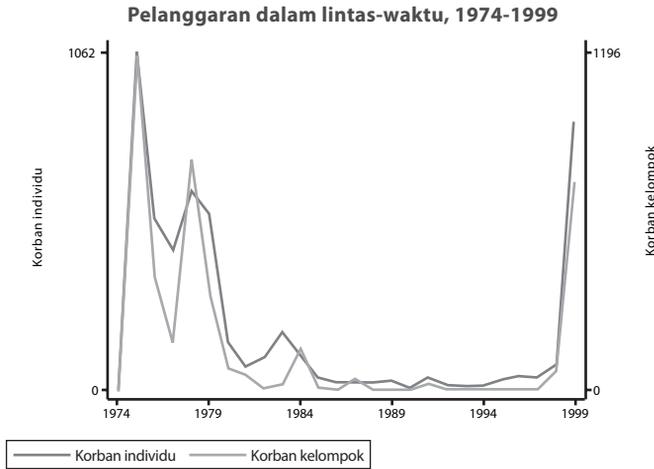
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Bagan ini menunjukkan hitungan korban individual dalam kelompok dengan ukuran tertentu

82. Baik pembunuhan maupun penghilangan memperlihatkan pola yang sama dalam hal proporsi pelanggaran yang dilakukan terhadap individu satu per satu atau individu berkelompok. Seperti yang terlihat pada Bagan Jumlah Korban

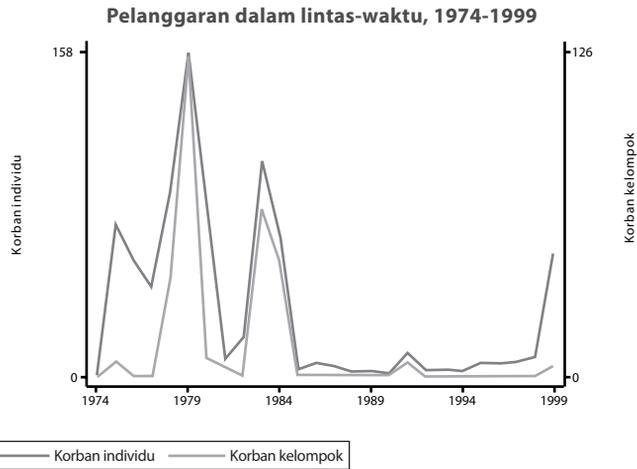
Pembunuhan Penduduk Sipil berdasarkan Ukuran Kelompok, 1974 – 1999 dan Bagan Jumlah Korban Tindakan Penghilangan berdasarkan Ukuran Kelompok, 1974 – 1999, 95,9% (5.120/5.339) dari pembunuhan yang dilaporkan dan 96,9% (835/862) dari penghilangan yang dilaporkan dilakukan terhadap individu satu-per-satu. Penemuan empiris ini muncul sesuai dengan hipotesis bahwa baik pembunuhan maupun penghilangan digunakan sebagai suatu bentuk penindasan yang lebih bersasaran.

83. Seperti yang diperlihatkan dua Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu di bawah ini, dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi, baik pembunuhan maupun penghilangan terhadap korban perorangan dan korban kelompok berkorelasi positif lintas waktu. Apabila jumlah pembunuhan yang dilaporkan terhadap individu naik, maka jumlah pembunuhan yang dilaporkan terhadap korban kelompok juga naik. Hal yang sama juga terjadi untuk kasus penghilangan yang dilaporkan. Oleh sebab itu, jumlah pembunuhan besar-besaran terhadap korban kelompok yang dilaporkan terpusat pada awal tahun-tahun invasi antara 1975 dan 1979, dan juga sama halnya dengan jumlah pembunuhan besar-besaran terhadap perorangan yang dilaporkan. Penghilangan besar-besaran terhadap korban kelompok yang dilaporkan terpusat pada periode kampanye operasi balasan terhadap Gerakan Resistansi pada 1979 dan 1984, dan juga sama halnya dengan jumlah penghilangan besar-besaran terhadap perorangan yang dilaporkan.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

* Korelasi koefisien lintas waktu antara pembunuhan individual dan pembunuhan kelompok yang dilaporkan adalah 0,95, sementara korelasi koefisien lintas waktu antara penghilangan individual dan penghilangan kelompok yang dilaporkan adalah 0,84.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

84. Paling tidak ada dua kemungkinan penjelasan bagi korelasi positif antara (i) pembunuhan individual dan pembunuhan kelompok yang dilaporkan dan (ii) penghilangan individual dan penghilangan kelompok yang dilaporkan:

- Baik pembunuhan terhadap individu maupun kelompok digerakkan oleh praktik-praktik yang sama atau kebijaksanaan yang sama dari pihak yang bertanggung jawab atas tindakan kriminal ini; hal yang sama juga berlaku untuk kasus penghilangan, atau
- Beberapa deponen dalam proses pengambilan pernyataan Komisi mempunyai kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain untuk secara spesifik mengidentifikasi korban perorangan dari pembunuhan dan penghilangan yang terjadi pada waktu serangan militer besar-besaran pada akhir dasawarsa 1970 dan antara 1983 dan 1984. Akibatnya beberapa deponen mungkin menggambarkan pembunuhan dan penghilangan ini sebagai hal yang dialami oleh sekelompok korban anonim.

85. Lepas dari penjelasan mana yang benar, data pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa penghilangan besar-besaran dan pembunuhan besar-besaran terpusat pada suatu waktu: pembunuhan besar-besaran terutama terpusat pada tahun-tahun awal invasi dan pendudukan (1975 – 1979), sementara penghilangan besar-besaran terpusat pada 1978 – 1979 pada masa akhir tahun-tahun invasi dan pada waktu operasi penumpasan balasan terhadap Gerakan Resistansi di distrik-distrik Timur dan, dalam cakupan yang lebih kecil, di mana-mana pada 1983 – 1984.

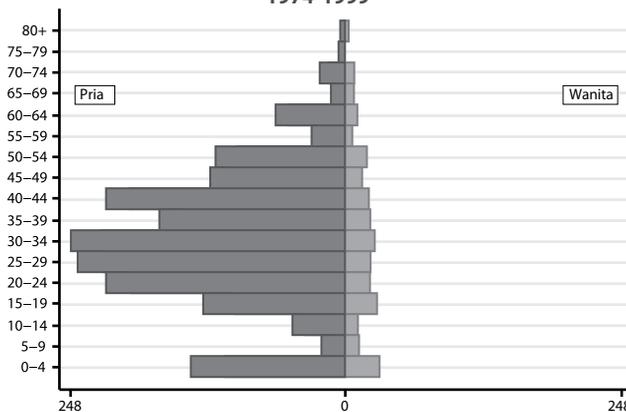
Pola dari pembunuhan dan penghilangan non-petempur yang dilaporkan menurut karakteristik demografis dan afiliasi politik korban

86. Penelitian Komisi mempertimbangkan apakah pembunuhan dan penghilangan dilaksanakan dengan suatu cara yang sistematis dan disasarkan pada korban dengan karakteristik demografis khusus (seperti usia dan jenis kelamin) atau afiliasi politik. Bagian ini akan membahas cakupan dan pola yang dilaporkan dari pembunuhan dan penghilangan menurut jenis kelamin dan usia korban dan apakah korban tersebut penduduk sipil, petempur Gerakan Resistansi yang bersenjata, atau aktivis politik.

87. Sebagian besar pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan pada waktu proses pengambilan pernyataan Komisi adalah korban laki-laki. 86,9% (4.451/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan adalah korban laki-laki dan 90,5% (756/836) dari penghilangan yang dilaporkan adalah juga laki-laki. Di samping itu, pemuda berusia antara 20 dan 34 merupakan kelompok usia korban pembunuhan dan penghilangan yang paling sering dilaporkan: 37,4% (663/2.090) dari korban pembunuhan yang usianya diketahui berasal dari kelompok usia ini.* 40,0% (138/345) dari korban penghilangan yang usianya dilaporkan berumur antara 20 dan 34.†

88. Seperti yang terlihat dalam dua Bagan Angka Tindak Pembunuhan Penduduk Sipil, Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin, 1974 – 1999 di bawah ini, lelaki muda berusia antara 20 dan 34 adalah korban pembunuhan dan penghilangan yang paling sering dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi.

Angka tindak pembunuhan penduduk sipil, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999



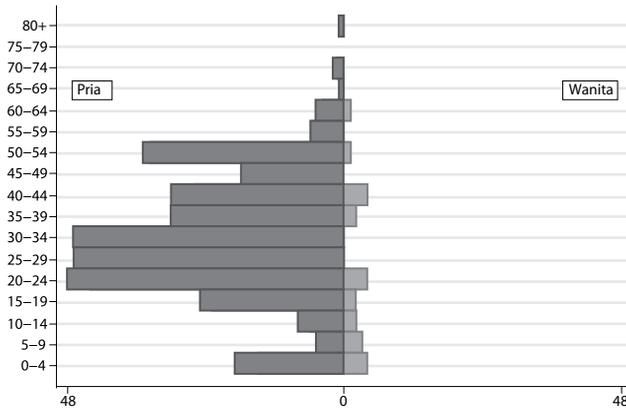
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: 59,6% data tidak merekam usia dan jenis kelamin

* Usia khusus untuk 59,6% (3.030/5.120) korban pembunuhan yang dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi adalah tidak diketahui atau tidak dilaporkan.

† Usia khusus dari 59,2% (490/835) korban penghilangan yang dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi adalah tidak diketahui atau tidak dilaporkan.

Angka tindak pembunuhan penduduk sipil, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999

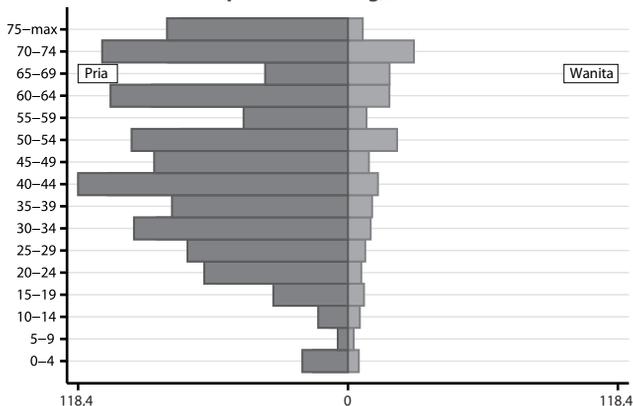


Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: 59,2% data tidak merekam usia dan jenis kelamin

89. Kalau kita beralih dari hitungan sederhana pelanggaran pembunuhan dan penghilangan ke hitungan pelanggaran berbasis penduduk, ada beberapa perbedaan yang bisa diteliti. Relatif terhadap keseluruhan penduduk Timor-Leste, laki-laki paruhbaya dan laki-laki tua mengalami tingkat tertinggi (relatif pada persentasenya terhadap penduduk) pembunuhan yang dilaporkan, dan laki-laki dari kelompok usia 50-54 tahun mengalami tingkat tertinggi (relatif pada persentasenya terhadap penduduk) penghilangan yang dilaporkan. Pola ini diperlihatkan pada dua Bagan Tingkat Pelanggaran Pembunuhan Penduduk Sipil yang Spesifik Berdasarkan Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 – 1999 di bawah ini.

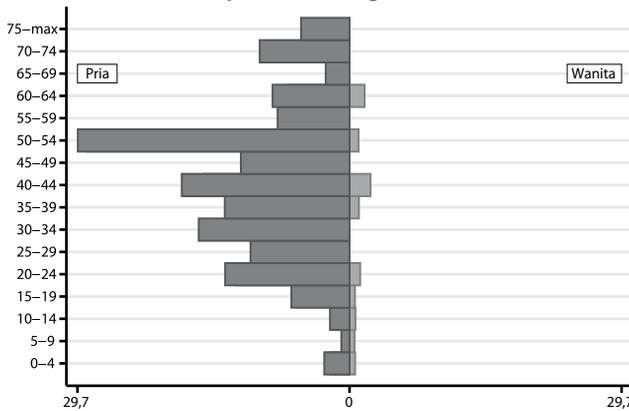
Tingkat pelanggaran pembunuhan penduduk sipil yang spesifik berdasarkan usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus penduduk 1990, statistik Indonesia

Catatan: 59,6% dari catatan pelanggaran tidak merekam usia dan jenis kelamin korban

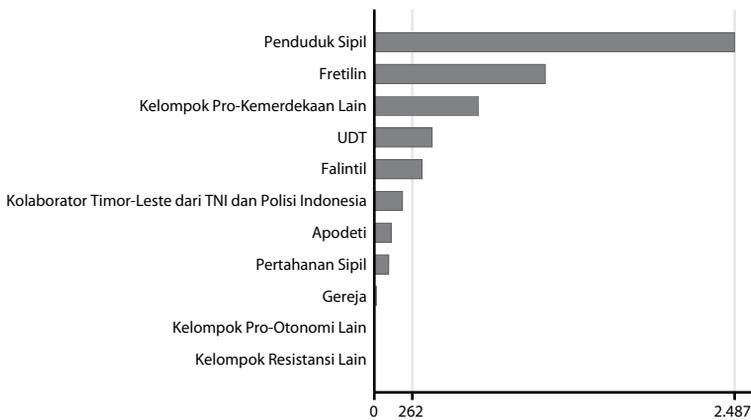
Tingkat pelanggaran pembunuhan penduduk sipil yang spesifik berdasarkan usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus penduduk 1990, statistik Indonesia
 Catatan: 59,2% dari catatan pelanggaran tidak merekam usia dan jenis kelamin korban

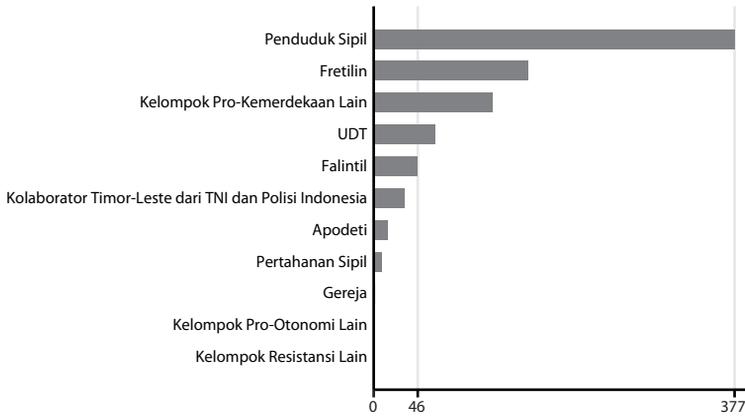
90. 48,7% (2.487/5.120) dari pembunuhan dan 45,3% (377/835) dari penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi dilakukan terhadap penduduk sipil, termasuk baik mereka yang tidak mempunyai afiliasi politik, maupun mereka yang secara formal menjadi anggota kelompok prokemerdekaan atau partai politik, seperti yang bisa dilihat pada dua Bagan Tindak Pembunuhan Penduduk Sipil Yang Dilaporkan, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1974 - 1999 di bawah ini.

Tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, berdasarkan afiliasi korban, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
 Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

**Tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan,
berdasarkan afiliasi korban, 1974-1999**



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

91. 40,9% (2.092/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi adalah terhadap korban-korban yang baik secara formal berafiliasi dengan Fretilin maupun dengan kelompok prokemerdekaan yang tidak secara langsung dapat dikaitkan sebagai petempur bersenjata. 6,4% (329/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan adalah terhadap korban-korban yang dilaporkan berafiliasi dengan Falintil.

92. 33,5% (280/835) dari penghilangan yang dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi adalah terhadap korban-korban yang baik secara formal berafiliasi dengan Fretilin maupun dengan kelompok prokemerdekaan yang tidak secara langsung dapat dikaitkan sebagai petempur bersenjata. 7,6% (64/835) dari penghilangan yang dilaporkan adalah terhadap korban-korban yang dilaporkan berafiliasi dengan Falintil.

93. Data pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa sebagian besar pembunuhan dan penghilangan dilakukan terhadap para anggota dan mereka yang dicurigai berasosiasi dengan Gerakan Resistansi (sekalipun orang-orang yang dicurigai berasosiasi dengan Gerakan Resistansi itu mungkin saja secara formal tidak ada hubungan dengan partai politik atau kelompok bersenjata).

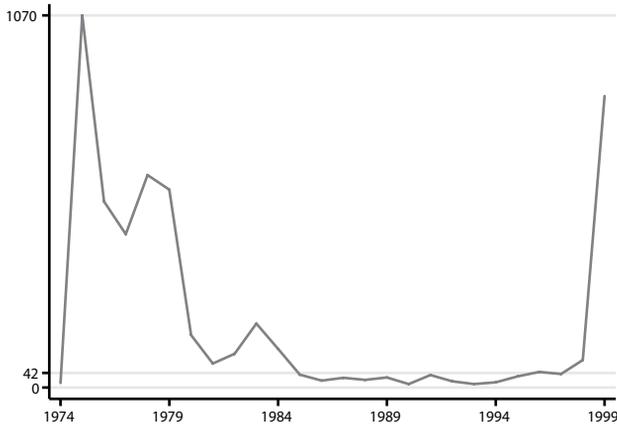
**Hubungan antara kematian terkait konflik
dengan lamanya penahanan**

94. Pola penahanan sewenang-wenang dan pembunuhan terhadap penduduk sipil yang dilaporkan kepada Komisi berkorelasi positif lintas waktu.* Tepatnya,

* Koefisien korelasi untuk kedua seri ini adalah 0,83.

baik pembunuhan terhadap non-petempur yang dilaporkan maupun penahanan sewenang-wenang banyak sekali terpusat pada waktu tahun-tahun awal invasi dan pendudukan Indonesia, seperti yang diperlihatkan dalam Bagan Jumlah Tindak Pembunuhan Penduduk Sipil Yang Dilaporkan, 1974 – 1999 dan Bagan Jumlah Tindak Penahanan Yang Dilaporkan, 1974 – 1999.

Jumlah tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah tindak penahanan yang dilaporkan, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

95. Selanjutnya, dari penduduk sipil yang dilaporkan mati karena sebab-sebab yang berkaitan dengan konflik (yaitu, baik kasus kematian penduduk sipil karena pembunuhan, kelaparan dan penyakit atau kasus penghilangan), 98,6% (10.659/10.809) dilaporkan paling tidak pernah sekali ditahan sewenang-wenang pada periode mandat Komisi. Seperti yang diperlihatkan dalam Tabel Pelanggaran Yang Dilaporkan dan Penahanan, Berdasarkan Distrik, 1974 – 1999, 3,5% (378/10.809) dari korban-korban ini mati pada waktu mereka masih berada dalam tahanan. Untuk 12,2% (1.314/10.809) dari orang mati berkaitan dengan konflik dan yang juga ditahan sewenang-wenang pada waktu periode mandat Komisi, tanggal penahanan mereka tidak diketahui. Oleh sebab itu, Komisi tidak dapat membedakan apakah kematian yang berkaitan dengan konflik ini terjadi pada saat si korban masih ditahan atau tidak pada saat itu. Meskipun begitu, dari korban-korban yang dilaporkan ditahan sewenang-wenang pada masa konflik, 15,7% (1.692/10.809) dari mereka mati karena peristiwa konflik tersebut.

Tabel 4: Pelanggaran yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan distrik, 1974 – 1999

| | Korban yang ditahan saat pelanggaran terjadi | % yang ditahan saat pelanggaran terjadi | Korban yang ditahan tapi dengan tanggal yang tak diketahui | % yang ditahan tapi dengan tanggal yang tak diketahui | Korban yang ditahan bukan saat pelanggaran terjadi | % yang ditahan bukan saat pelanggaran terjadi | Korban yang tak pernah ditahan | % yang tak pernah ditahan | Total |
|----------|--|---|--|---|--|---|--------------------------------|---------------------------|-------|
| Lautém | 455 | 19,7 | 1.307 | 56,6 | 479 | 20,8 | 67 | 2,9 | 2.308 |
| Viqueque | 401 | 13,0 | 1.371 | 44,4 | 1.245 | 40,4 | 68 | 2,2 | 3.085 |
| Baucau | 785 | 31,8 | 891 | 36,1 | 639 | 25,9 | 155 | 6,3 | 2.470 |
| Manatuto | 271 | 16,0 | 921 | 54,5 | 465 | 27,5 | 34 | 2,0 | 1.691 |
| Manufahi | 771 | 23,8 | 1.305 | 40,3 | 924 | 28,5 | 237 | 7,3 | 3.237 |
| Aileu | 477 | 26,6 | 867 | 48,3 | 412 | 23,0 | 38 | 2,1 | 1.794 |
| Ermera | 986 | 24,8 | 1.128 | 28,4 | 1.641 | 41,3 | 216 | 5,4 | 3.971 |
| Liquiçá | 695 | 42,8 | 448 | 27,6 | 405 | 25,0 | 75 | 4,6 | 1.623 |
| Dili | 1504 | 40,3 | 1.267 | 34,0 | 646 | 17,3 | 314 | 8,4 | 3.731 |
| Ainaro | 457 | 21,6 | 1.005 | 47,5 | 582 | 27,5 | 72 | 3,4 | 2.116 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Covalima | 886 | 41,5 | 401 | 18,8 | 729 | 34,1 | 119 | 5,6 | 2.135 |
| Oecussi | 366 | 12,6 | 249 | 8,6 | 2.201 | 76,0 | 81 | 2,8 | 2.897 |
| Bobonaro | 992 | 32,7 | 793 | 26,1 | 1.133 | 37,3 | 116 | 3,8 | 3.034 |
| Indonesia | 48 | 9,0 | 76 | 14,3 | 390 | 73,2 | 19 | 3,6 | 533 |
| | 9.094 | 100,0 | 12.029 | 100,0 | 11.891 | 100,0 | 1.611 | 100,0 | 34.625 |

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang diberikan kepada CAVR

96. Dari pelanggaran fatal yang dilaporkan kepada Komisi yang terjadi sementara korban masih berada di tahanan, 96,6% (365/378) dari mereka adalah pembunuhan dan penghilangan penduduk sipil dan 3,4% (13/378) adalah kematian karena lapar dan penyakit. Sebaliknya, pembagian menurut sebab kematian untuk orang yang mati berkaitan dengan konflik yang terjadi di luar tahanan kelihatan sangat berbeda: 49,0% (4.390/8.967) dari korban yang dicatat Komisi mati karena pembunuhan atau penghilangan, sedangkan sisanya yang 51,0% (4.577/8.967) mati karena kelaparan dan penyakit. Oleh sebab itu, data kuantitatif Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa orang-orang relatif berisiko lebih tinggi untuk dibunuh atau dihilangkan saat berada di penjara dibandingkan bila mereka tidak dalam tahanan.

Tabel 5: Pelanggaran fatal yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis pelanggaran, 1974 – 1999

| | Korban yang ditahan saat pelanggaran terjadi | % yang ditahan saat pelanggaran terjadi | Korban yang ditahan tapi dengan tanggal yang tak diketahui | % yang ditahan tapi dengan tanggal yang tak diketahui | Korban yang ditahan bukan saat pelanggaran terjadi | % yang ditahan bukan saat pelanggaran terjadi | Korban yang tak pernah ditahan | % yang tak pernah ditahan | Total |
|-----------------------------|--|---|--|---|--|---|--------------------------------|---------------------------|--------|
| Pembunuhan penduduk sipil | 295 | 5,8 | 807 | 15,8 | 3.887 | 76,1 | 118 | 2,3 | 5.107 |
| Kematian akibat deprivation | 13 | 0,3 | 273 | 5,6 | 4.577 | 94,0 | 6 | 0,1 | 4.869 |
| Penghilangan | 70 | 8,4 | 234 | 28,1 | 503 | 60,4 | 26 | 3,1 | 833 |
| | 378 | 100,0 | 1314 | 100,0 | 8.967 | 100,0 | 150 | 100,0 | 10.809 |

Sumber: Basis Data Laporan Amnesty International tentang Timor-Leste

97. Pola kematian yang berkaitan dengan konflik dan hubungannya dengan periode penahanan bervariasi pada tahap-tahap masa konflik. Seperti yang terlihat dalam Tabel Pelanggaran Fatal Yang Dilaporkan dan Penahanan, Berdasarkan Tahapan, 1974 – 1999, kematian di dalam tahanan yang dilaporkan sangat banyak terpusat pada tahap-tahap pertama dan akhir masa konflik. Kematian berkaitan dengan konflik yang terjadi di luar tahanan (untuk korban-korban yang pernah ditawan sewenang-wenang pada periode mandat Komisi) sangat banyak terjadi pada tahap pertama konflik: 85,3% (7.651/8.967) dari kematian berkaitan dengan konflik ini terjadi pada tahap pertama konflik, sedangkan 8,5% (762/8.967) terjadi pada 1999.

Tabel 6: Pelanggaran fatal yang dilaporkan dan konteks penahannya, berdasarkan tahapan, 1974 – 1999

| | Korban yang ditahan saat pelanggaran terjadi | % yang ditahan saat pelanggaran terjadi | Korban yang ditahan tapi dengan tanggal yang tak diketahui | % yang ditahan tapi dengan tanggal yang tak diketahui | Korban yang ditahan bukan saat pelanggaran terjadi | % yang ditahan bukan saat pelanggaran terjadi | Korban yang tak pernah ditahan | % yang tak pernah ditahan | Total |
|---------------------|--|---|--|---|--|---|--------------------------------|---------------------------|--------|
| Tahap 1 (1974-1983) | 216 | 2,4 | 1.172 | 12,8 | 7.651 | 83,8 | 88 | 1,0 | 9.127 |
| Tahap 2 (1984-1998) | 48 | 6,5 | 114 | 15,3 | 554 | 74,6 | 27 | 3,6 | 743 |
| Tahap 3 (1999) | 114 | 12,1 | 28 | 3,0 | 762 | 81,2 | 35 | 3,7 | 939 |
| | 378 | 100,0 | 1.314 | 100,0 | 8.967 | 100,0 | 150 | 100,0 | 10.809 |

Sumber: Basis Data Laporan Amnesty International tentang Timor-Leste

Pelanggaran-pelanggaran nonfatal

Pengantar

98. Dalam bagian ini kami akan menyajikan analisis pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi. Analisis ini tidak mengandung perkiraan mengenai keseluruhan cakupan, pola, dan kecenderungan pelanggaran nonfatal, karena analisis ini didasarkan pada sampel kemudahan (sampel nonacak) dari pernyataan naratif yang dikumpulkan oleh Komisi. Namun demikian, analisis ini menyajikan pola-pola statistik pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada

Komisi dan memberikan hipotesis yang mendapat dukungan dari data tersebut. Di samping itu, kami membandingkan pola statistik dan kecenderungan yang diteliti dalam data Komisi mengenai pelanggaran nonfatal dengan data yang dikumpulkan bersamaan waktunya oleh Amnesty International dan juga dengan data yang dikumpulkan oleh NGO Timor-Leste, yaitu Fokupers, segera setelah Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

Tinjauan dari temuan statistik mengenai pelanggaran nonfatal

99. Bagian ini meringkas temuan-temuan utama analisis statistik deskriptif Komisi mengenai hampir 8.000 pernyataan naratif yang dikumpulkan dari ke-13 distrik di Timor-Leste.

- Pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi sangat banyak terpusat pada periode awal invasi dan pendudukan oleh pasukan militer Indonesia, dan sekitar waktu Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB: 56,3% (33.224/60.047) dari pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang dicatat terjadi antara 1975 dan 1984, sedangkan 21,0% (12.634/60.047) terjadi pada 1999.
- Di hampir semua distrik, kecuali Oecussi, penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan merupakan pelanggaran yang paling sering dilaporkan, berkisar antara 69,4% sampai 82,7% dari pelanggaran yang dilaporkan di distrik. Di Oecussi, pelanggaran terhadap integritas fisik (seperti penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan) berjumlah 43,0% dari seluruh pelanggaran di distrik tersebut. Dibandingkan dengan distrik-distrik lain, di Oecussi, pelanggaran harta milik dan ekonomi dilaporkan dalam proporsi yang lebih tinggi, yakni 30,8% (1.271/4.133) dari keseluruhan pelanggaran di distrik tersebut.
- Pola pelanggaran nonfatal pada saat tahap pertama dan tahap terakhir konflik berbeda dari wilayah ke wilayah. Sementara kekerasan pada masa awal invasi Indonesia 1975 paling gencar terjadi di Wilayah Barat dan Tengah, setelah 1976 fokus pelanggaran nonfatal beralih ke Wilayah Timur.
- Pembagian menurut umur-jenis kelamin yang didokumentasi untuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan ini sungguh serupa, dan masing-masing menunjukkan bahwa kelompok korban yang paling banyak tercatat untuk jenis-jenis pelanggaran ini adalah laki-laki muda dalam usia dinas militer (usia antara 20 dan 49). Sangat sedikit tindak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang tercatat dialami oleh korban perempuan. Sebaliknya, banyak sekali korban perempuan yang mengalami pelanggaran seksual: 90,1% (769/853) dari pelanggaran seksual yang tercatat Komisi dialami oleh korban perempuan.
- Data Komisi tentang pelanggaran nonfatal secara umum menunjukkan peningkatan dalam perbandingan orang dewasa terhadap anak-anak selama masa tersebut, yaitu, semakin mendekati pengujung masa konflik, semakin naik jumlah korban dewasa jika dibandingkan dengan korban anak-anak.

- Laporan yang bersamaan waktunya dari Amnesty International memperlihatkan tiga gelombang yang berbeda dalam hal penahanan perorangan yang identitasnya diketahui, yaitu pada 1985, 1989 – 1993, dan 1994 – 1999, masing-masing 402, 891, dan 811 orang. Sementara itu, laporan retrospektif yang diberikan kepada pernyataan naratif Komisi menyebutkan jumlah terbanyak penahanan sewenang-wenang terjadi pada 1999 dan sekitar 1975 – 1984.
- Analisis komparatif Komisi antara data statistiknya sendiri dengan laporan yang bersamaan waktunya dari Amnesty International memperlihatkan bahwa meskipun kelompok-kelompok hak asasi manusia, seperti Amnesty International, secara seksama mencatat situasi hak asasi manusia di Timor-Leste sepanjang dasawarsa 1980 dan 1990-an, pelaporan yang dilakukan jauh lebih rendah daripada skala keseluruhan kekerasan nonfatal pada waktu itu, khususnya pada waktu tahun-tahun awal masa invasi dan pendudukan.
- Bukti statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa kegiatan penahanan militer Indonesia berubah dari fokus pada korban baik perorangan maupun kelompok pada tahun-tahun awal 1977 – 1984 ke strategi lebih bersasaran yang berfokus pada tahanan perorangan saja mulai 1985 sampai 1999. Bukti statistik Komisi juga memperlihatkan korelasi positif antara tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap korban kelompok maupun korban perorangan sepanjang waktu.
- Pola penahanan dan penyiksaan yang dilaporkan sepanjang waktu sangat berkorelasi positif. Sepanjang waktu, kekerasan menjadi semakin terkoordinasi dan ukuran tindak penyiksaan yang dilaporkan sepanjang waktu juga semakin meningkat (antara akhir dasawarsa 1970 dan pertengahan dasawarsa 1980) dibandingkan dengan jumlah tindak penahanan yang dilaporkan. Bukti statistik Komisi juga memperlihatkan bahwa sepanjang waktu (dan khususnya setelah 1984) praktik penahanan sewenang-wenang menjadi lebih bersasaran dan semakin umum digunakan bersamaan dengan tindak penyiksaan.
- Penyalahgunaan yang paling sering terjadi dalam masa-masa penahanan yang diketahui adalah penyiksaan (38,4%, 4.267/9.094), penganiayaan (33,2%, 27.998/9.094), dan pengancaman (21,3%, 634/9.094). Selanjutnya, penyiksaan dan penganiayaan lebih jarang dilaporkan di antara para korban yang tidak pernah mengalami penahanan: dari keseluruhan penyiksaan yang didokumentasi oleh Komisi, 16,4% (1.820/11.123) diderita oleh para korban yang tidak pernah mengalami penahanan. Bukti statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa korban yang ditahan lebih tinggi kerentanannya untuk mengalami penyiksaan dan penganiayaan daripada para korban yang tidak pernah mengalami penahanan pada periode acuan Komisi.
- Distrik-distrik yang melaporkan proporsi penyiksaan dan penganiayaan yang relatif lebih tinggi juga cenderung melaporkan lebih banyak pelanggaran selama penahanan.

- Anak-anak dan orang-orang yang lebih tua ditahan jauh lebih jarang, dan jika ditahan, mereka mengalami tingkat penganiayaan yang jauh lebih rendah.
- Data yang dikumpulkan secara sendiri-sendiri oleh Komisi dan Amnesty International memastikan bahwa sejumlah besar orang pernah ditahan di Pulau Ataúro pada periode antara 1980 dan 1984, di samping adanya penahanan besar-besaran yang berlangsung terus di bagian lain di Timor-Leste.
- 88,7% (68.943/77.748) dari pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi adalah pelanggaran terhadap penduduk sipil. Akan tetapi, ketika gerakan prokemerdekaan makin terorganisasi dan terbuka menjelang dan setelah Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB pada 1999, jumlah penduduk sipil dengan afiliasi prokemerdekaan yang menderita pelanggaran nonfatal meningkat.
- Sebagian besar pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi: 62,2% (37.343/60.047) dari pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang tercatat dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi, 38,7% (23.253/60.047) dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka dari pasukan pendudukan Indonesia, dan 11,9% (7.157/60.047) dikaitkan dengan Gerakan Resistansi.*
- Analisis kuantitatif Komisi mengenai penahanan sewenang-wenang sesuai dengan hipotesis bahwa koordinasi dan kerjasama antara pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka terutama menjadi kuat setelah militer Indonesia menguasai sebagian besar Timor-Leste dan memulai pengonsolidasian wilayah pendudukan mereka, dan kemudian juga pada 1999 pada saat menjelang dan setelah masa Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.
- Data statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa pada 1999 militer Indonesia dan polisi membantu dan bersekongkol dengan pasukan pembantu mereka (khususnya milisi-milisi yang pro-otonomi) dalam penggunaan penahanan sewenang-wenang secara luas pada masa menjelang dan setelah Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

Keterangan mendalam analisis statistik pelanggaran nonfatal

Distribusi keseluruhan pelanggaran nonfatal yang dilaporkan

100. Besarnya skala keseluruhan dari proses pengambilan pernyataan yang dijalankan oleh Komisi belum pernah dialami sebelumnya, bila dibandingkan

* Perhatikan bahwa untuk beberapa pelanggaran yang dilaporkan, pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan itu dapat dikaitkan pada lebih daripada satu lembaga. Oleh karena itu, angka persentase untuk pelaku yang bertanggung jawab tidak mencapai 100%.

dengan semua proyek-proyek dokumentasi HAM terdahulu yang pernah dilakukan di Timor-Leste.

101. Seperti tampak pada Bagan Pelanggaran Nonfatal Berdasarkan Sumber Data, 1974 - 1999 jenis-jenis pelanggaran nonfatal yang didokumentasi oleh Komisi, Amnesty International, dan Fokupers cukup berbeda. Ini mencerminkan perbedaan sifat dari ketiga proyek tersebut dan perbedaan jaringan sosial yang dapat diakses dengan strategi pengumpulan data ketiga institusi tersebut. Dari semua pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi, 42,3% (25.347/59.972) adalah penahanan, 18,5% (11.123/59.972) adalah penyiksaan, dan 14,1% (8.436/59.972) adalah penganiayaan. Sebaliknya, proporsi penahanan (23,4% [184/788]) dan penyiksaan (7,5% [59/788]) yang jauh lebih rendah dilaporkan kepada Fokupers dibanding dengan yang dilaporkan kepada CAVR, meskipun proporsi pemindahan dan penganiayaan kurang lebih sama antara yang dilaporkan kepada Fokupers dengan yang dilaporkan kepada CAVR.

102. Fokupers adalah lembaga hak asasi perempuan yang juga menyediakan layanan pendampingan dan rehabilitasi kepada perempuan. Fokupers mencatat proporsi pemerkosaan yang lebih besar dibanding CAVR dan Amnesty International: 7,7% (86/1.115) dari semua pelanggaran nonfatal yang mereka dokumentasikan adalah pemerkosaan. Sebaliknya, dari pelanggaran yang tercatat dalam laporan-laporan Amnesty International yang tersedia, 59,7% (3.272/5.479) adalah penahanan, 18% (986/5.479) adalah pengadilan yang tidak adil, dan 11,5% (631/5479) adalah tindak penyiksaan .

Tabel 7: Pelanggaran nonfatal berdasarkan sumber data, 1974 – 1999

| Jenis Pelanggaran | Basis Data Pernyataan CAVR | Basis Data Fokupers | Basis Data Amnesty | % CAVR | % Fokupers | % Amnesty | Total |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|--------|------------|-----------|--------|
| Percobaan Pembunuhan Penduduk Sipil | 1.966 | 49 | 215 | 3,3 | 6,2 | 3,5 | 2.230 |
| Penahanan | 25.383 | 184 | 3.672 | 42,3 | 23,3 | 60,1 | 29.239 |
| Penyiksaan | 11.135 | 59 | 666 | 18,5 | 7,5 | 10,9 | 11.860 |
| Pemerkosaan | 393 | 84 | 12 | 0,7 | 10,6 | 0,2 | 489 |
| Perbudakan Seksual | 98 | 25 | 1 | 0,2 | 3,2 | 0,0 | 124 |
| Kekerasan Seksual | 221 | 31 | 43 | 0,4 | 3,9 | 0,7 | 295 |
| Penganiayaan | 8.443 | 98 | 0 | 14,1 | 12,4 | 0,0 | 8.541 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| Pernikahan Paksa | 131 | 4 | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 135 |
| Penghambatan Hak Reproduksi | 10 | 1 | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 11 |
| Pengadilan Tak Adil | 213 | 0 | 1.155 | 0,4 | 0,0 | 18,9 | 1.368 |
| Penghancuran Rumah | 2.231 | 51 | 25 | 3,7 | 6,5 | 0,4 | 2.307 |
| Pemusnahan Ternak | 409 | 6 | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 415 |
| Pemerasan | 2.095 | 44 | 19 | 3,5 | 5,6 | 0,3 | 2.158 |
| Ancaman | 2.987 | 136 | 64 | 5,0 | 17,2 | 1,1 | 3.187 |
| Perekutan Paksa | 2.157 | 10 | 7 | 3,6 | 1,3 | 0,1 | 2.174 |
| Kerja Paksa | 2.175 | 9 | 0 | 3,6 | 1,1 | 0,0 | 2.184 |
| Lain-lain | 0 | 0 | 227 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 227 |
| Total | 60.047 | 791 | 6.106 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66.944 |

Sumber: Basis Data CAVR dan Pernyataan serta Laporan Fokupers dan Amnesty International

103. Distribusi relatif korban per pelanggaran untuk jenis-jenis pelanggaran yang berbeda, kurang lebih serupa antara proyek-proyek CAVR, Fokupers, dan Amnesty International, seperti ditunjukkan dalam tabel-tabel di bawah ini. CAVR cenderung mendokumentasikan agak lebih banyak pelanggaran per korban dibanding proyek-proyek Fokupers dan Amnesty Internasional. Rata-rata, 2,36 pelanggaran per korban dilaporkan kepada CAVR, dibandingkan dengan 2,01 dan 1,53 yang dilaporkan ke Fokupers dan Amnesty. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan karakter dari proyek-proyek yang berbeda tersebut. CAVR mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran untuk seluruh periode mandat, termasuk tahun-tahun awal invasi, sementara kerja Amnesty terkonsentrasi sebagian besar pada tahun-tahun konsolidasi pendudukan dan dikumpulkan selama konflik ketika komunikasi antara Timor dan dunia luar sangat terbatas. Proyek Fokupers terfokus hampir secara khusus pada tahap ketiga dari konflik, yakni seputar masa Jajak Pendapat yang diawasi PBB. Fokupers secara khusus mengandalkan para deponen perempuan dan terfokus pada dokumentasi pelanggaran seksual.

| Tabel 8: Distribusi relatif korban per pelanggaran, data CAVR | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Jenis Pelanggaran | Jumlah Pelanggaran | Persentase Pelanggaran | Jumlah Korban | Persentase korban | Pelanggaran per korban |
| Penahanan | 25.347 | 42,3 | 17.169 | 67,4 | 1,48 |
| Penyiksaan | 11.123 | 18,5 | 8.508 | 33,4 | 1,31 |
| Penganiayaan | 8.436 | 14,1 | 6.872 | 27,0 | 1,23 |
| Pelanggaran Properti/ ekonomi | 4.735 | 7,9 | 3.851 | 15,1 | 1,23 |
| Lain-lain | 4.339 | 7,2 | 4.030 | 15,8 | 1,08 |
| Ancaman | 2.982 | 5,0 | 2.653 | 10,4 | 1,12 |
| Perekrutan Paksa | 2.157 | 3,6 | 1.988 | 7,8 | 1,09 |
| Pelanggaran Berbasis Seksual | 853 | 1,4 | 657 | 2,6 | 1,30 |
| | 59.972 | | 25.460 | | 2,36 |

Catatan: proporsi korban berjumlah lebih daripada 100% karena satu korban mungkin mengalami lebih daripada satu jenis pelanggaran

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang diberikan kepada CAVR

| Tabel 9: Distribusi relatif korban per pelanggaran, data Fokupers | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Jenis Pelanggaran | Jumlah Pelanggaran | Persentase Pelanggaran | Jumlah Korban | Persentase korban | Pelanggaran per korban |
| Penahanan | 184 | 23,4 | 168 | 42,7 | 1,10 |
| Pelanggaran Berbasis Seksual | 145 | 18,4 | 104 | 26,5 | 1,39 |
| Ancaman | 136 | 17,3 | 119 | 30,3 | 1,14 |
| Pelanggaran properti/ ekonomi | 99 | 12,6 | 86 | 21,9 | 1,15 |
| Penganiayaan | 98 | 12,4 | 92 | 23,4 | 1,07 |
| Penyiksaan | 59 | 7,5 | 59 | 15,0 | 1,00 |
| Lain-lain | 57 | 7,2 | 54 | 13,7 | 1,06 |
| Perekrutan Paksa | 10 | 1,3 | 10 | 2,5 | 1,00 |
| 0 | 788 | | 393 | | 2,01 |

Catatan: proporsi korban berjumlah lebih daripada 100% karena satu korban mungkin mengalami lebih daripada satu jenis pelanggaran

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang diberikan kepada Fokupers

Tabel 10: Distribusi relatif korban per pelanggaran, data Amnesty International

| Jenis Pelanggaran | Jumlah Pelanggaran | Persentase Pelanggaran | Jumlah Korban | Persentase korban | Pelanggaran per korban |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Penahanan | 3.272 | 59,7 | 3.073 | 86,0 | 1,06 |
| Lain-lain | 1.412 | 25,8 | 1.383 | 38,7 | 1,02 |
| Penyiksaan | 631 | 11,5 | 600 | 16,8 | 1,05 |
| Ancaman | 61 | 1,1 | 59 | 1,7 | 1,03 |
| Pelanggaran Berbasis Seksual | 55 | 1,0 | 43 | 1,2 | 1,28 |
| Pelanggaran properti/ ekonomi | 44 | 0,8 | 43 | 1,2 | 1,02 |
| Perekutan Paksa | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 1,00 |
| 0 | 5.479 | | 3.572 | | 1,53 |

Catatan: proporsi korban berjumlah lebih daripada 100% karena satu korban mungkin mengalami lebih daripada satu jenis pelanggaran

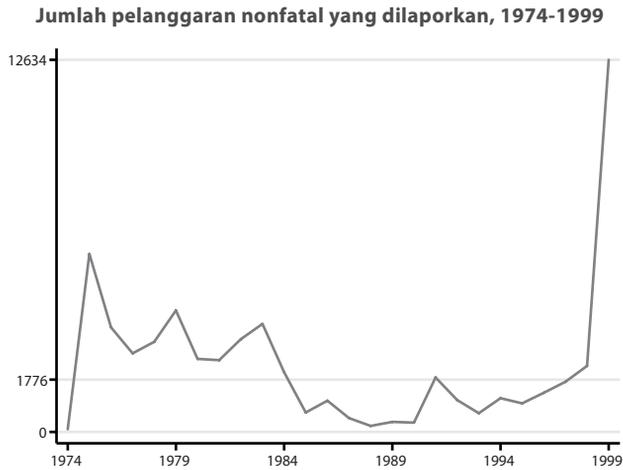
Sumber: Basis Data Laporan Amnesty International tentang Timor-Leste

Tiga tahap kekerasan skala besar di Timor-Leste

104. Komisi mendefinisikan tiga tahap konflik antara April 1974 – September 1999. Tahap pertama mencakup invasi dan pendudukan awal Indonesia atas Timor-Leste, dari 1975 sampai 1984. Tahap kedua adalah konsolidasi dan normalisasi pendudukan, dari 1985 sampai 1998. Tahap ketiga adalah tiga triwulan pertama 1999, yaitu masa seputar proses Jajak Pendapat yang disponsori PBB.

105. Seperti yang tampak pada Bagan Jumlah Pelanggaran Nonfatal yang Dilaporkan, 1974 – 1999, terdapat tingkat pelanggaran nonfatal yang tinggi selama masa invasi dan pendudukan awal. Selama tahap kedua, secara umum terjadi pelanggaran nonfatal dalam tingkat yang relatif lebih rendah dan terjadi konsentrasi penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan seputar masa pembantaian Santa Cruz 1991. Tahap kedua, yaitu normalisasi, mencakup gelombang penahanan dan penyiksaan fisik yang baru atas anggota dan kolaborator gerakan Resistansi. Tahap terakhir dari konflik, yang mencakup masa menjelang Jajak Pendapat dan juga masa setelah Jajak Pendapat dan dikerahkannya pasukan multinasional Interfet (International Force in East Timor), menghasilkan dua gelombang pembunuhan, pemindahan, dan penjarahan yang berbeda. Tahap terakhir ini ditandai dengan pelanggaran

skala besar yang terkonsentrasi pada tenggat waktu yang singkat yang dilakukan oleh “milisi pro-otonomi” yang didukung, dilatih, dipersenjatai, dan diarahkan oleh militer Indonesia.

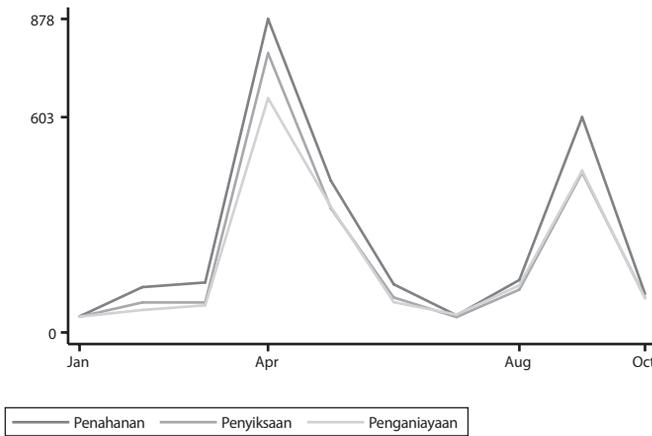


Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

106. Pola pelanggaran nonfatal ini menyerupai pola pelanggaran fatal seperti dibahas di atas. Yaitu, pelanggaran secara besar-besaran selama tahun-tahun awal invasi dan pendudukan, kemudian diikuti dengan tingkat kekerasan yang relatif rendah selama tahun-tahun konsolidasi dan normalisasi, dan diakhiri dengan peningkatan kekerasan pada 1999.

107. Selama 1999, pelanggaran yang dilaporkan sangat terkonsentrasi pada April dan September. Seperti tampak pada Bagan Jumlah Penahanan, Penyiksaan, dan Penganiayaan yang Dilaporkan, 1999, pola penahanan, penganiayaan, dan penyiksaan yang dilaporkan berkorelasi positif dalam lintas waktu, yaitu ketika salah satu pelanggaran meningkat, yang lain juga cenderung meningkat dan sebaliknya. Ketiga jenis pelanggaran tersebut dilaporkan memuncak pada April dengan puncak yang lebih kecil pada September, meskipun keduanya serupa dalam hal skala. Pada 1999, kekerasan yang dilaporkan terkonsentrasi pada dua lonjakan utama, sebelum dan sesudah proses Jajak Pendapat yang disponsori PBB. Pola ini konsisten dengan hipotesis yang mengatakan bahwa intimidasi fisik digunakan secara terkoordinasi untuk menakut-nakuti penduduk Timor-Leste menjelang kedatangan misi UNAMET PBB yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan referendum, dan kemudian sebagai pembalasan segera setelah dilakukannya pemungutan suara.

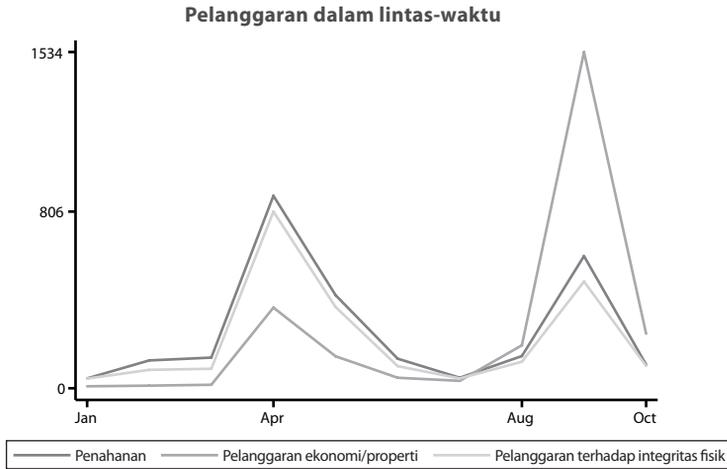
Jumlah penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan, 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: 4,4% penahanan yang dilaporkan; 3,4% penyiksaan yang dilaporkan; dan 4,3% penganiayaan yang dilaporkan terjadi pada 1999 tidak mencatat bulan kejadian

108. Praktik milisi dukungan Indonesia dan militer Indonesia mengalami pergeseran signifikan setelah Jajak Pendapat dibanding sebelumnya (lihat juga Bab 7.9: Hak ekonomi dan sosial). Seperti ditunjukkan pada Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu, jenis penindasan yang paling sering digunakan sebelum pemungutan suara adalah pelanggaran integritas fisik (seperti penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan). Segera setelah referendum, penjarahan dan bentuk-bentuk pelanggaran harta benda dan ekonomi paling sering digunakan. Sesudah Jajak Pendapat, pelanggaran integritas fisik terjadi pada tingkat yang sedikit lebih rendah dibanding pada periode sebelumnya, tetapi masih jauh di bawah pelanggaran harta benda. Pola ini tampaknya konsisten dengan hipotesis yang mengatakan bahwa militer Indonesia dan milisi beralih dari menggunakan pelanggaran-pelanggaran integritas fisik untuk menekan penduduk memilih otonomi sebelum Jajak Pendapat, menjadi aksi-aksi balas dendam sesudah Jajak Pendapat yang mencakup penjarahan besar-besaran dan penghancuran harta benda bersama dengan aksi-aksi balas dendam berupa kekerasan fisik. Yang terakhir ini mungkin dapat dikaitkan dengan upaya menekan penduduk agar mau pindah ke Timor Barat, Indonesia.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

109. Data empiris Komisi tentang pola-pola pelanggaran nonfatal lintas waktu pada 1999 sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa kekerasan pada 1999 tersebut terkoordinasi.

Tingkatan pertanggungjawaban institusional yang dilaporkan untuk pelanggaran nonfatal

Distribusi keseluruhan dari pertanggungjawaban institusional untuk pelanggaran nonfatal yang dilaporkan

110. Sejumlah lembaga terlibat dalam tindak kekerasan selama masa konflik. Kelompok institusional yang utama adalah militer Indonesia, Falintil, partai-partai politik Timor-Leste (seperti Fretilin, UDT, dan Apodeti), anggota sipil pasukan pertahanan Timor-Timur di bawah kendali pemerintah Indonesia (seperti Hansip, Wanra, dan Ratih), serta milisi-milisi dan pasukan pembantu mereka lainnya. Bagian ini akan membahas tingkat pertanggungjawaban dari kelompok-kelompok institusional pelaku utama pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang paling pokok.

111. Mayoritas dari pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi dikaitkan dengan militer Indonesia dan para kolaborator Timor mereka, seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini: 41,2% (37.298/90.635) pelaku yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran nonfatal dikaitkan dengan militer Indonesia, dan 25,6% (23.230/90.635) dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka (seperti milisi-milisi, pasukan pertahanan sipil, dan pejabat lokal yang bekerja di bawah administrasi Indonesia). Untuk 7,9% (7.146/90.635) dari pelanggaran yang dilaporkan, pelaku pertanggungjawabannya dikaitkan dengan gerakan Resistansi dan pasukan prokemerdekaan.

Tabel 11: Pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi

| Jenis Pelanggaran | Militer Indonesia | Kolaborator orang Timor dari TNI | Kelompok Resistansi | Lain-lain | Penduduk Sipil | Kelompok Pro-Otonomi | Tak Diketahui | Total |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------------|---------------|--------|
| Penahanan | 17.749 | 8.675 | 3.303 | 3.792 | 771 | 222 | 3.268 | 25.347 |
| Penyiksaan | 7.130 | 3.903 | 1.172 | 1.228 | 293 | 61 | 2.463 | 11.123 |
| Penganiayaan | 4.628 | 3.354 | 1.075 | 1.252 | 214 | 96 | 2.216 | 8.436 |
| Pelanggaran properti/ekonomi | 1.802 | 3.058 | 416 | 346 | 129 | 65 | 2.319 | 4.735 |
| Lain-lain | 2.367 | 1.634 | 789 | 735 | 73 | 34 | 1.020 | 4.339 |
| Ancaman | 1.458 | 1.590 | 236 | 251 | 55 | 28 | 1.143 | 2.982 |
| Perekrotan Paksa | 1.556 | 740 | 122 | 131 | 47 | 12 | 456 | 2.157 |
| Pelanggaran Berbasis Seksual | 608 | 276 | 33 | 26 | 11 | 1 | 203 | 853 |
| | 37.298 | 23.230 | 7.146 | 7.761 | 1.593 | 519 | 13.088 | 59.972 |

Pertanggungjawaban atas pelanggaran bisa saja dibagi di antara pelaku, sehingga kolom-kolom tersebut tak dapat dijumlahkan satu sama lain secara langsung.

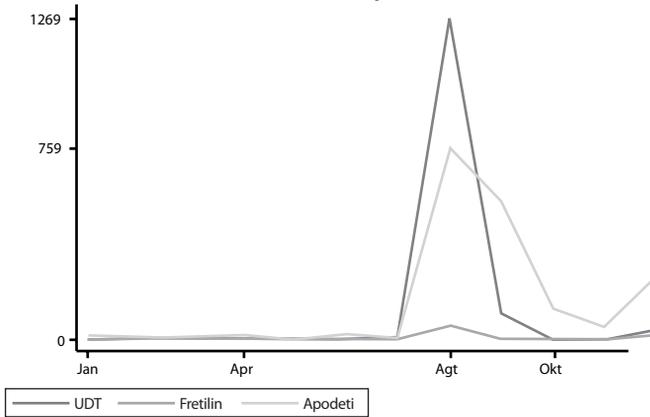
Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

Pola-pola lintas waktu pertanggungjawaban institusional untuk pelanggaran nonfatal

112. Tingkat pertanggungjawaban institusional untuk pelanggaran nonfatal yang tercatat berbeda-beda selama masa konflik. Pada 1975, 51,0% (6.229/12.206) dari pelaku yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang tercatat oleh Komisi dikaitkan dengan militer Indonesia, sedangkan yang 29,9% (3.653/12.206) dikaitkan dengan partai-partai politik Timor-Leste.

113. Dari pelanggaran nonfatal yang tercatat yang terjadi pada 1975, 31,2% (3.169/10.162) dikaitkan dengan Fretilin, 19,4% (1.972/10.162) dikaitkan dengan UDT, dan 2,6% (261/10.162) dengan Apodeti. Seperti yang diperlihatkan pada Bagan Jumlah Pelanggaran Nonfatal yang Dikaitkan dengan Fretilin, UDT, dan Apodeti, 1975, sebagian sangat besar pelanggaran nonfatal yang didokumentasikan pada 1975 (yang diketahui bulan pasti saat pelanggaran itu dilakukan) yang dikaitkan kepada partai-partai politik Timor-Leste terjadi pada Agustus dan September.

**Jumlah pelanggaran nonfatal yang dikaitkan dengan
Fretilin, UDT, dan Apodeti, 1975**



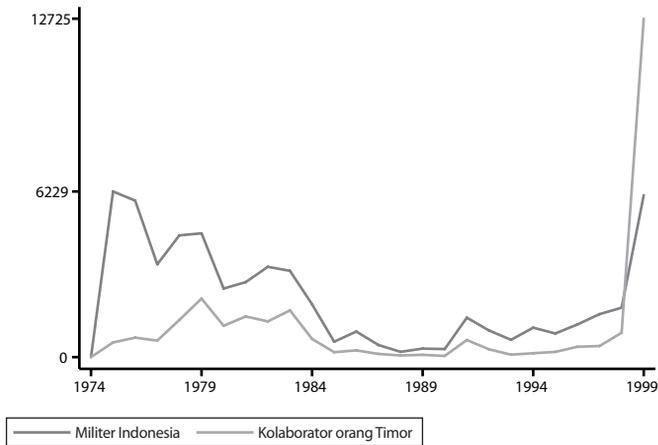
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: 22,0%; 41,0%; dan 53,1% pelanggaran nonfatal yang berturut-turut dikaitkan dengan UDT, Fretilin, dan Apodeti tidak merekam informasi tentang bulan kejadian

114. Seperti yang diperlihatkan pada Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu, pada periode saat pendudukan militer Indonesia berkembang dari 1977 ke 1984, pola pelanggaran nonfatal yang dikaitkan dengan militer Indonesia dan pasukan pembantu mereka berkorelasi secara positif.^{*} Selanjutnya, pelaku pertanggungjawaban antara 1977 dan 1984 secara relatif jauh lebih tinggi dikaitkan dengan satuan pertahanan sipil dan pasukan pembantu ABRI lainnya dibandingkan pada waktu tahun-tahun awal invasi (1975 – 1976) atau pada tahun-tahun konsolidasi antara 1985 dan 1998. Data statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa militer Indonesia banyak mengandalkan pasukan pembantu mereka antara 1977 dan 1984 untuk mengendalikan aktivitas Gerakan Resistansi dan penormalisasian pendudukan melalui cara pelanggaran terhadap integritas fisik. Dari seluruh pelanggaran nonfatal yang dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka antara 1977 dan 1984, 54,0% (4.660/8.633) merupakan tindak penahanan, 16,6% (1.435/8.663) merupakan tindak penyiksaan, dan 10,9% (938/8.633) merupakan tindak penganiayaan.

^{*} Koefisien korelasi untuk pelanggaran nonfatal yang dilaporkan yang dikaitkan kepada militer Indonesia dan polisi dan mereka yang terkait dengan pasukan pembantu mereka adalah 0,88.

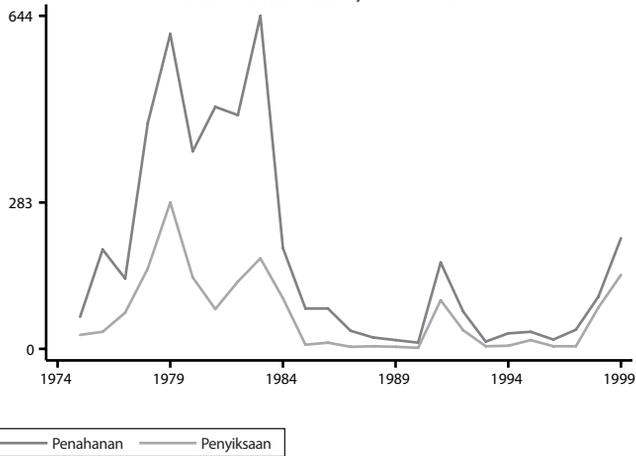
Pelanggaran dalam lintas-waktu



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

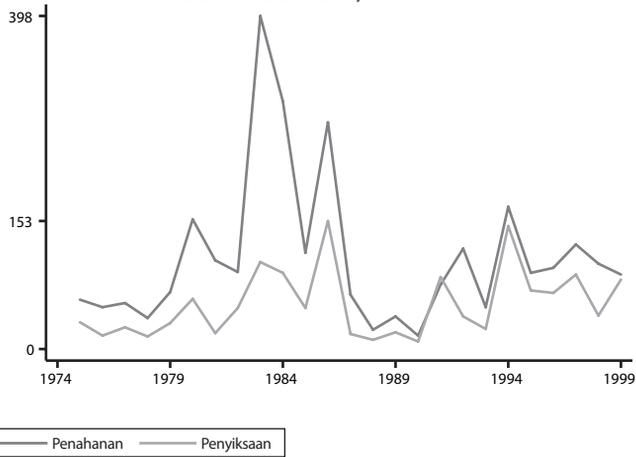
115. Deponen-deponen dari proses pengambilan pernyataan Komisi mengaitkan pertanggungjawaban besar kepada satuan-satuan tertentu pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan kolaborator Timor mereka dalam waktu-waktu tertentu selama masa konflik. Seperti yang diperlihatkan Bagan Pelanggaran Nonfatal yang Dilakukan oleh Satuan Pertahanan Sipil dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999 dan Bagan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Kopassus dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999, setelah terjadinya konflik antarpantai dan masa awal invasi pada 1975, ada kenaikan dalam pertanggungjawaban dalam penahanan dan penyiksaan oleh satuan pertahanan sipil antara 1978 dan 1983, sedangkan setelah itu Kopassandha/ Kopassus (Pasukan Khusus Indonesia) melaksanakan beberapa ratus penahanan dan tindak penyiksaan yang dilaporkan pada 1984 dan 1986. Pada akhir 1990-an, seperti yang terlihat pada Bagan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Polisi dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999, pertanggungjawaban untuk penahanan dan penyiksaan dikaitkan kepada polisi. Jumlah besarnya penahanan dan penyiksaan yang dikaitkan dengan pasukan pertahanan sipil pada 1983 adalah 1,6 kali lebih besar daripada penahanan dan tindak penyiksaan yang dikaitkan dengan Kopassandha pada tahun yang sama dan 2,0 kali lebih besar daripada yang dikaitkan dengan polisi pada 1999.

Pelanggaran nonfatal yang dilakukan oleh satuan Pertahanan Sipil dalam lintas-waktu, 1974-1999



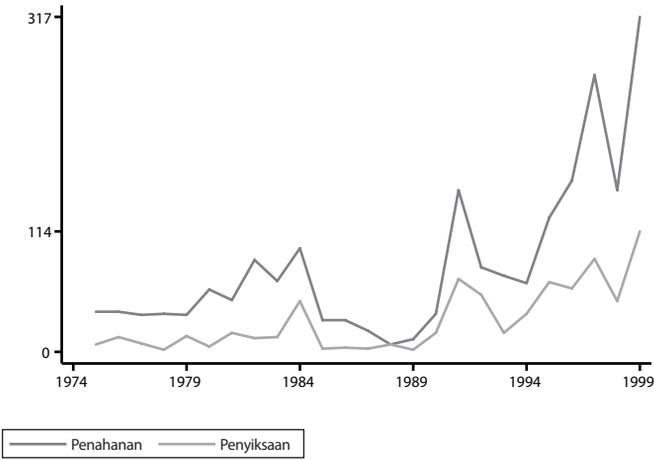
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Pelanggaran yang dilakukan oleh Kopassus dalam lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

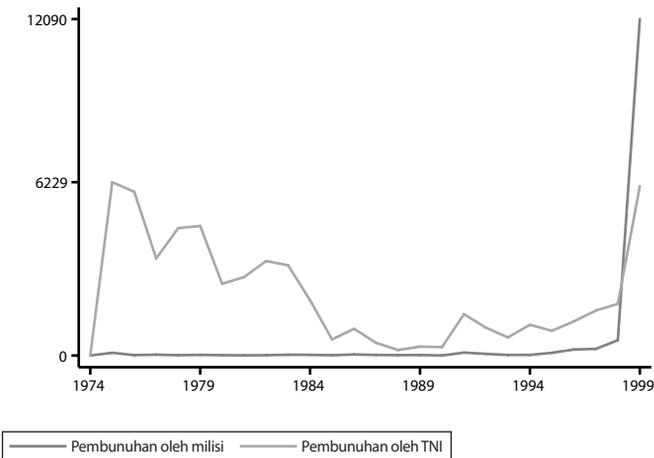
Pelanggaran nonfatal yang dilakukan oleh Polisi dalam lintas-waktu, 1974-1999



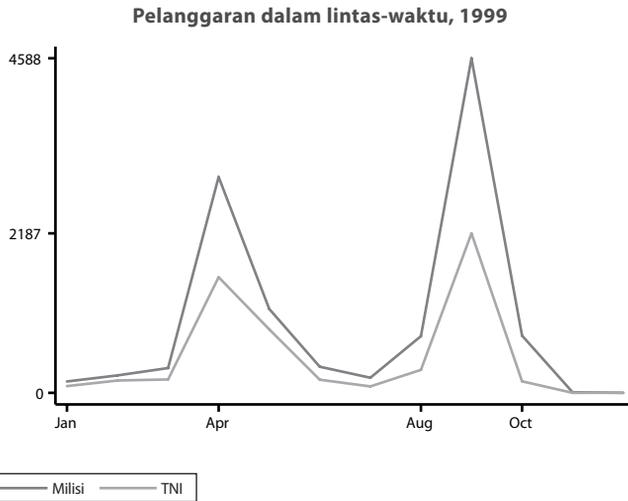
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

116. Sebaliknya pada 1999, banyak sekali pertanggungjawaban untuk pelanggaran nonfatal dikaitkan dengan milisi dan militer Indonesia—jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh milisi dua kali lebih banyak daripada pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang dilakukan oleh militer Indonesia, seperti yang terlihat pada Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999 dan Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu, 1999.

Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

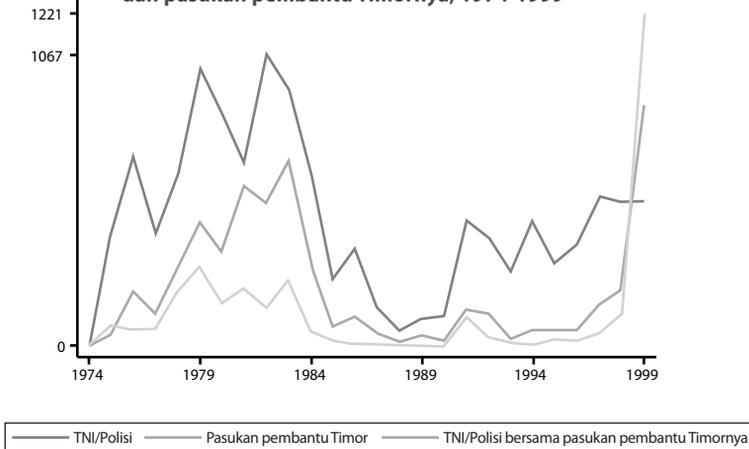


Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

117. Kadang-kadang, pelanggaran nonfatal hanya dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi saja, lain kali hanya dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka saja, dan kali lainnya lagi dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi yang bekerja sama dengan pasukan pembantu mereka. Pola pertanggungjawaban bersama atau secara individu antara pasukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka dibedakan menurut jenis pelanggaran dan lintas waktu.

118. Dari tindak penahanan sewenang-wenang yang didokumentasi oleh Komisi, 82,3% (20.867/25.347) dikaitkan dengan pasukan keamanan Indonesia, pasukan pembantu mereka, atau dengan keduanya. Seperti yang terlihat dalam Bagan Tindak Penahanan yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1974 - 1999, tindak penahanan sewenang-wenang yang dilaporkan yang dikaitkan hanya dengan militer Indonesia dan polisi, dengan pasukan pembantu mereka, atau dengan tindak bersama dari kedua pasukan itu berkorelasi positif sepanjang waktu. Khususnya, masa-masa saat banyak tindak penahanan tercatat dikaitkan dengan tindak bersama kedua pasukan itu (selain dengan tindak mandiri masing-masing pasukan) adalah termasuk juga masa awal invasi dan pendudukan (terutama antara 1978 dan 1983) dan sekitar waktu diadakannya Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB. Oleh karena itu analisis kuantitatif Komisi mengenai penahanan sewenang-wenang sesuai dengan hipotesis bahwa koordinasi dan kerjasama antara pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka terutama menjadi kuat setelah militer Indonesia menguasai sebagian besar Timor-Leste dan memulai pengonsolidasian wilayah pendudukan mereka, dan kemudian juga pada 1999 pada saat menjelang dan setelah masa Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

Tindak penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

119. Antara 1975 dan 1998, tindak penahanan sewenang-wenang yang hanya dikaitkan dengan militer Indonesia saja jauh lebih banyak terjadi dibandingkan dengan tindak penahanan sewenang-wenang yang hanya dikaitkan dengan pasukan pembantu saja atau gabungan antara pasukan pendudukan Indonesia dengan pasukan pembantu mereka. Tetapi, pada 1999 hampir semua tindak penahanan dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka. Dari tindak penahanan sewenang-wenang 1999 yang dicatat oleh Komisi, 75,7% (2.104/2.779) dikaitkan dengan baik hanya tindakan mandiri pasukan pembantu mereka saja atau tindakan pasukan itu bersama dengan militer Indonesia dan polisi, sementara 19,2% (534/2.779) dari tindak penahanan yang dicatat yang terjadi pada 1999 hanya dikaitkan dengan militer Indonesia. Hampir semua tindakan ini dilaporkan terjadi pada April, Mei, dan September 1999, seperti yang terlihat pada Bagan Tindak Penahanan yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1974 - 1999. Pola statistik yang dihasilkan memperlihatkan adanya perencanaan dan koordinasi operasional antara kedua pasukan dalam cara pelaksanaan tindakan sewenang-wenang itu. Pada bulan-bulan tersebut pemerintah Indonesia meyakinkan PBB bahwa pasukan militernya sedang mencoba untuk mengendalikan kekerasan di Timor-Leste. Meskipun begitu, data statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa pada 1999 militer Indonesia dan polisi, ali-alih menahan pasukannya (khususnya milisi-milisi yang pro-otonomi), malah membantu dan bersekongkol dengan pasukan pembantu mereka dalam melaksanakan tindak penahanan sewenang-wenang yang meluas pada masa menjelang dan setelah Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

120. Pola pertanggungjawaban yang diterakan baik secara mandiri maupun secara bersamaan terhadap pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantu mereka mempunyai persamaan penting dengan pola penahanan sewenang-wenang,

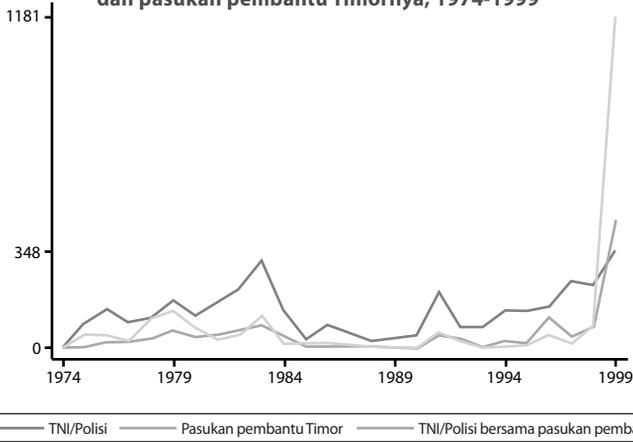
meskipun tindak penganiayaan dan penyiksaan digunakan dengan lebih bersasaran.* Jumlah yang mirip yaitu 82,5% (16.135/19.559) dari penganiayaan dan penyiksaan yang tercatat dikaitkan dengan pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka. Pada 1999, sama dengan tindak penahanan sewenang-wenang, 75,8% (3.278/4.324) dari tindak penganiayaan dan penyiksaan yang dilaporkan juga dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka (baik bertindak sendiri atau bertindak bersama dengan militer Indonesia dan polisi). Meskipun begitu, pada 1999 dilaporkan tindak penganiayaan dan penyiksaan terjadi dalam jumlah yang lebih besar daripada kasus-kasus penahanan sewenang-wenang yang tercatat antara 1974 dan 1998, seperti yang bisa kita lihat apabila kita membandingkan Bagan Tindak Penyiksaan yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1974 - 1999 dan Tindak Penganiayaan yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1974 - 1999 dengan Bagan Tindak Penahanan yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1974 - 1999.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

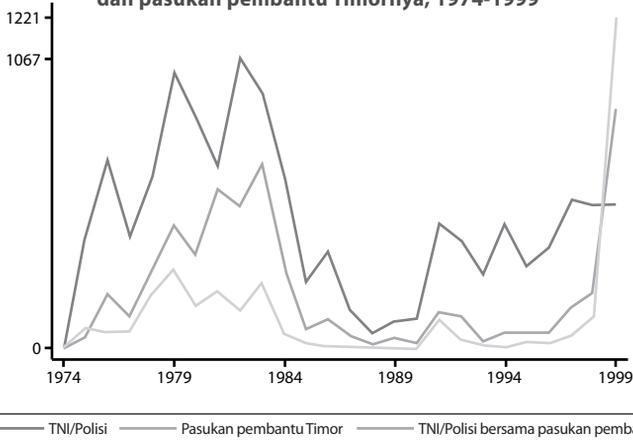
* Untuk penjelasan yang lebih terperinci mengenai sifat lebih bersasarannya tindak penyiksaan dan penganiayaan dibandingkan dengan tindak penahanan, lihat bagian mengenai tiga tahapan kekerasan besar-besaran di Timor-Leste di atas.

Tindak penganiayaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

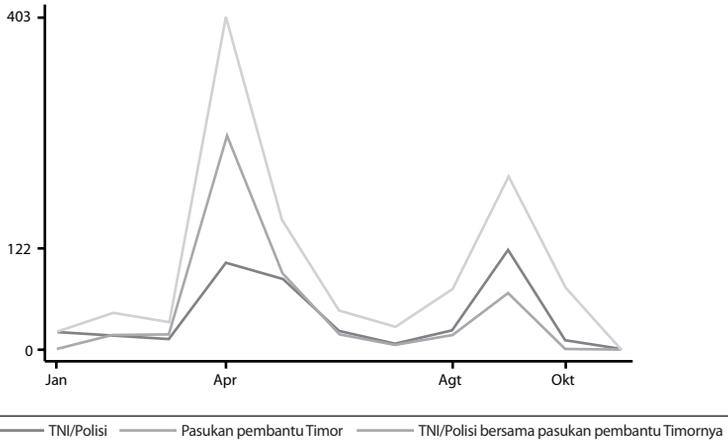
Tindak penganiayaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

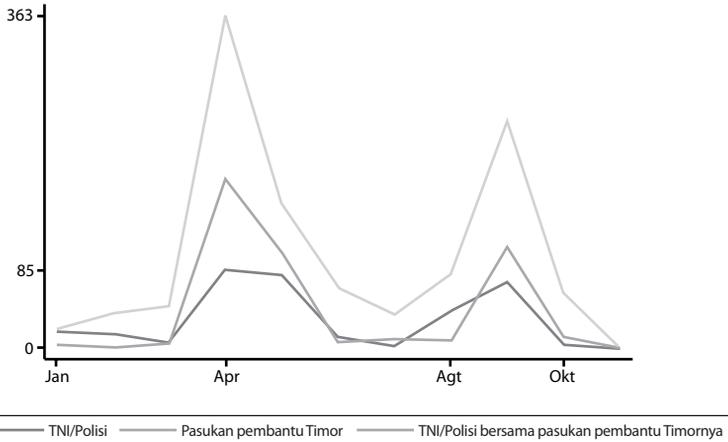
121. Pada 1999 pola dan skala tindak penyiksaan dan penganiayaan yang tercatat yang dikaitkan dengan pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka, baik bertindak sendiri atau bertindak bersama, hampir sama dengan tindak penahanan sewenang-wenang yang tercatat pada 1999, seperti yang bisa terlihat dalam Bagan Tindak Penyiksaan yang Tercatat yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1999 dan Tindak Penganiayaan yang Tercatat yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1999.

Tindak penyiksaan yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Tindak penganiayaan yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974-1999



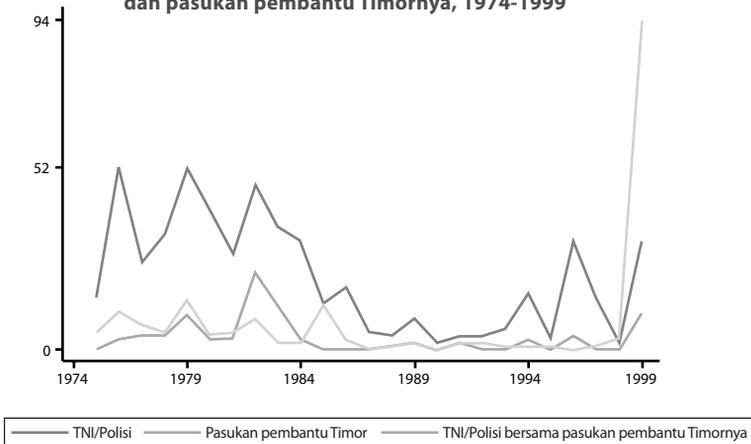
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

122. Oleh karena itu, seperti dalam kasus penahanan sewenang-wenang, data statistik Komisi mengenai tindak penganiayaan dan penyiksaan sesuai dengan hipotesis bahwa koordinasi dan kerjasama antara pasukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka terutama menjadi kuat setelah militer Indonesia menguasai sebagian besar Timor-Leste dan memulai pengonsolidasian wilayah pendudukan mereka, dan kemudian juga pada 1999 pada saat menjelang dan setelah masa Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

123. Sifat dan pola keterkaitan pelaku pertanggungjawaban untuk pelanggaran tercatat yang bersifat seksual dan yang menyangkut harta milik/ekonomi sangat berbeda dengan tindakan-tindakan yang tercatat untuk tindak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan.

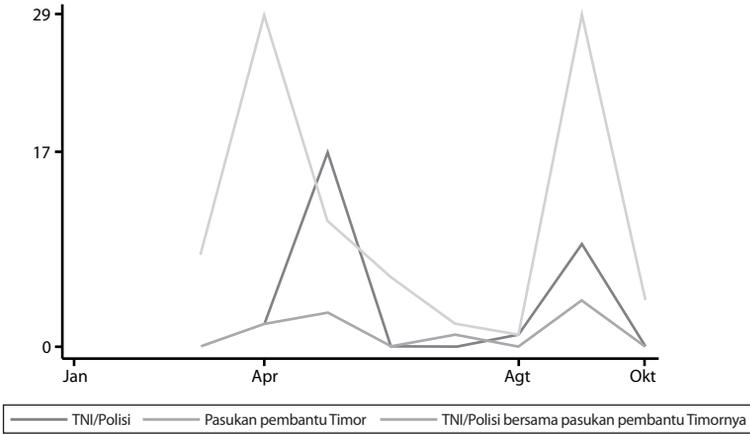
124. Proporsi yang tinggi dari pelanggaran seksual dikaitkan hanya dengan militer Indonesia saja, sedangkan proporsi yang jauh lebih rendah dari pelanggaran seksual dikaitkan dengan pasukan pendudukan Indonesia yang bertindak bersama dengan pasukan pembantu mereka. Tepatnya, 61,0% (520/853) dari pelanggaran seksual dikaitkan hanya dengan militer Indonesia dan polisi, 22,0% (188/853) dikaitkan dengan hanya pasukan pembantu mereka, dan 10,3% (88/853) dikaitkan dengan tindakan bersama pasukan-pasukan tersebut. Seperti halnya dengan pelanggaran nonfatal lainnya, jumlah pelanggaran seksual yang dikaitkan hanya dengan militer Indonesia antara 1975 dan 1998 adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan pelanggaran yang sama yang dikaitkan dengan hanya pasukan pembantu mereka atau dengan tindakan bersama pasukan-pasukan tersebut. Sebaliknya untuk 1999, mayoritas pelanggaran seksual (66,2% [94/142]) yang dilaporkan kepada Komisi hanya dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka saja. Pola-pola lintas waktu ini diperlihatkan pada Bagan Tindak Pelanggaran Berbasis Seks yang Tercatat yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1974 – 1999 dan Tindak Pelanggaran Berbasis Seks yang Tercatat yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1999.

Tindak pelanggaran berbasis seks yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

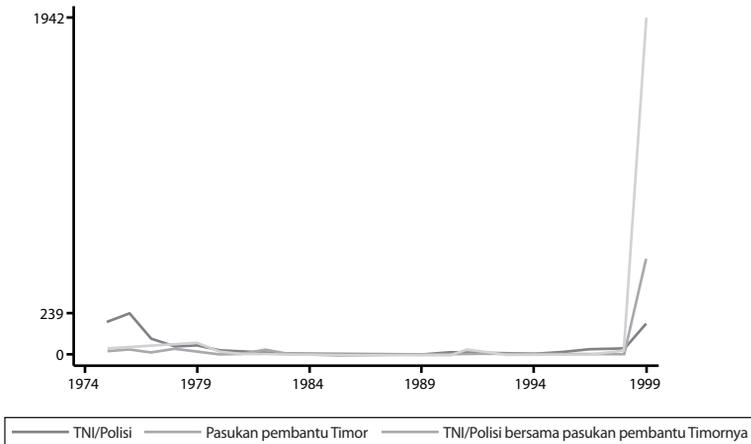
Tindak pelanggaran berbasis seks yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

125.65,1% (2.673/4.105) dari pelanggaran-pelanggaran yang tercatat dalam hal hak milik/ekonomi yang terjadi pada 1999 dikaitkan dengan pasukan pendudukan Indonesia dan/atau pasukan pembantu mereka, baik bertindak sendiri maupun bertindak bersama. Seperti yang bisa dilihat pada Bagan Tindak Pelanggaran Ekonomi/Properti yang Tercatat yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1974 - 1999, 70,2% (1.942/2.766) dari pelanggaran-pelanggaran yang tercatat dalam hal hak milik/ekonomi yang terjadi pada 1999 dikaitkan hanya dengan pasukan pembantu mereka, 20,0% (553/2.766) dikaitkan dengan tindakan bersama pasukan-pasukan tersebut, dan 6,4% (178/2.766) dikaitkan dengan hanya militer Indonesia dan polisi. Analisis kuantitatif Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa hampir semua penghancuran harta milik dan ekonomi dilaksanakan pada 1999 dan biasanya sebagian besar hanya dilakukan oleh para milisi dengan kolaborasi dari militer Indonesia dan polisi.

Tindak pelanggaran ekonomi/properti yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Variasi dalam pelanggaran nonfatal yang dilaporkan lintas wilayah

126. Data naratif Komisi tidak bisa digunakan untuk mengkaji secara langsung perbedaan skala pelanggaran antarwilayah dan distrik. Data berdasarkan sampel nonacak hanya akan dapat mewakili keseluruhan skala kekerasan lintas wilayah sejauh para deponen yang memberi pernyataannya dapat mewakili populasi lokal mereka dan dipilih sesuai dengan proporsi kekerasan yang terjadi di masing-masing distrik. Seperti yang dipaparkan di atas, informasi naratif yang dikumpulkan oleh Komisi, Fokupers, dan Amnesty International semuanya mengandung sejumlah bias. Akibatnya, pola pelanggaran nonfatal di seluruh wilayah disampaikan dalam Bagian ini untuk memberi gambaran tentang proses-proses sosial pengumpulan data oleh Komisi, Fokupers, dan Amnesty International, dan untuk mengkaji apakah pola-pola yang dilaporkan di seluruh wilayah konsisten dengan analisis dan argumentasi kualitatif yang relevan.

127. Tabel Pelanggaran Berdasarkan Distrik memperlihatkan jumlah setiap pelanggaran per distrik yang dilaporkan dalam proses pengambilan pernyataan Komisi. Angka pelanggaran yang dilaporkan untuk Dili jauh lebih tinggi dibandingkan distrik lain manapun, yakni 14,0% (8.389/59.972) dari semua pelanggaran di seluruh negeri. Distrik-distrik lain dengan angka pelanggaran yang relatif tinggi adalah Ermera, Manufahi, Viqueque, dan Lautém. Di hampir semua distrik, kecuali Oecussi, penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan adalah pelanggaran yang paling sering dilaporkan, berkisar antara 69,4% dan 82,7% dari seluruh pelanggaran yang dilaporkan di distrik-distrik. Di Oecussi, pelanggaran integritas fisik berjumlah 43,0% dari seluruh pelanggaran di distrik tersebut. Dibandingkan dengan distrik-distrik lain, di

Oecussi pelanggaran harta benda dan ekonomi dilaporkan dalam proporsi yang lebih tinggi, yakni 30,8% (1.271/4.133) dari keseluruhan pelanggaran di distrik tersebut.* Pelanggaran harta benda dan ekonomi di distrik-distrik yang lain dilaporkan lebih jarang—yakni rata-rata 7,4% (3.464/56.574) dari pelanggaran yang dilaporkan.

Tabel 12: Pelanggaran berdasarkan distrik (1)

| Pelanggaran | Lautém | Viqueque | Baucau | Manatuto | Manufahi | Aileu | Ermera | Total |
|---------------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------|-------|--------|--------|
| Penahanan | 2.696 | 2.412 | 2.366 | 1.414 | 2.237 | 1.520 | 2.010 | 14.655 |
| Pelanggaran terhadap Integritas Fisik | 909 | 905 | 976 | 695 | 1.094 | 658 | 1.281 | 6.518 |
| Pelanggaran Ekonomi/ Properti | 80 | 610 | 289 | 103 | 189 | 123 | 578 | 1.972 |
| | 1.319 | 1.570 | 1.205 | 893 | 1.954 | 1.013 | 2.112 | 10.066 |
| | 5.004 | 5.497 | 4.836 | 3.105 | 5.474 | 3.314 | 5.981 | 33.211 |

Pelanggaran berdasarkan distrik (2)

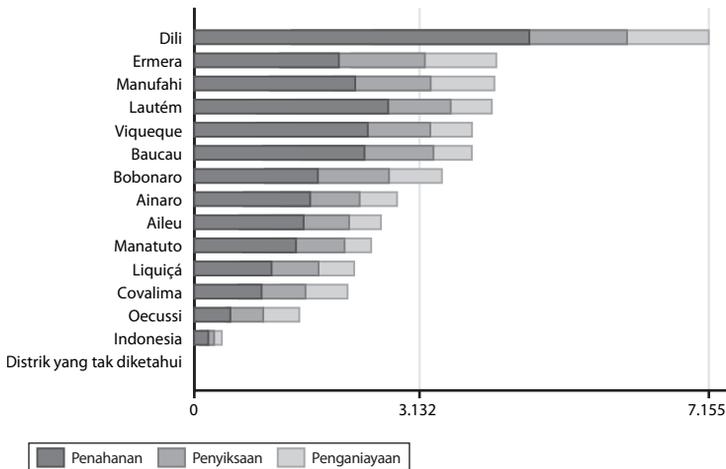
| Pelanggaran | Liquiçá | Dili | Ainaro | Covalima | Oecussi | Bobonaro | Indonesia | Total |
|---------------------------------------|---------|-------|--------|----------|---------|----------|-----------|--------|
| Penahanan | 1.074 | 4.658 | 1.611 | 935 | 501 | 1.718 | 195 | 10.692 |
| Pelanggaran terhadap Integritas Fisik | 662 | 1.367 | 743 | 641 | 460 | 1.035 | 90 | 4.998 |
| Pelanggaran Ekonomi/ Properti | 103 | 229 | 232 | 227 | 1.271 | 505 | 196 | 2.763 |
| | 858 | 2.135 | 1.141 | 1.267 | 1.166 | 1.494 | 247 | 8.308 |
| | 2.697 | 8.389 | 3.727 | 3.070 | 3.398 | 4.752 | 728 | 26.761 |

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

* 96,8% (1.230/1.271) dari pelanggaran harta benda di Oecussi dilaporkan terjadi pada 1999. Lebih lanjut, 94,0% (3.194/3.398) dari pelanggaran yang dilaporkan di Oecussi terjadi pada 1999. Karena itu tampak bahwa berbeda dengan distrik-distrik lain, pelanggaran di Oecussi hampir seluruhnya terjadi pada 1999.

128. Walaupun pelanggaran atas integritas fisik yang dilaporkan kepada Komisi merupakan 61,5% (36.911/60.047) dari seluruh pelanggaran nonfatal yang tercatat, penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan tidak terdokumentasi dengan proporsi yang sama di setiap distrik, seperti yang tampak pada Bagan Pelanggaran yang Tercatat, Berdasarkan Jenis dan Distrik. Dili, khususnya, memiliki proporsi penahanan lebih tinggi dibanding jumlah tindak penganiayaan dan penyiksaan yang didokumentasi. Sementara di Bobonaro, Ainaro, Aileu, Manatuto, Liquiçá, dan Covalima tercatat proporsi penahanan yang lebih rendah dibanding proporsi penganiayaan dan penyiksaan. Data Komisi adalah sesuai dengan hipotesis bahwa kebijakan dan praktik penahanan dan penganiayaan fisik berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Analisis empiris Komisi secara khusus menemukan bahwa walaupun penahanan lebih sering terjadi di Dili, penganiayaan dan penyiksaan digunakan lebih jarang di sana dibanding di wilayah lain.

Bagan pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik



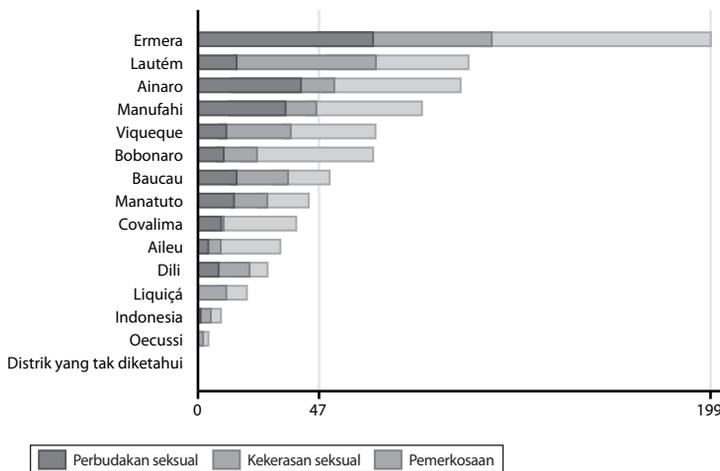
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

129. Pelanggaran berbasis seksual yang dicatat oleh Komisi mencapai 1,4% (853/59.972) dari seluruh pelanggaran yang dilaporkan. Namun, di Ermera, Ainaro, dan Lautém, Komisi menemukan proporsi pelanggaran seksual yang relatif lebih tinggi—masing-masing 3,3% (199/5.981), 2,7% (102/3.727), dan 2,1% (105/5.004) dari keseluruhan pelanggaran yang dilaporkan. Pelanggaran seksual dilaporkan lebih sedikit terjadi di Dili dan Oecussi—masing-masing 0,3% (27/8.389) dan 0,1% (4/3.398) dari seluruh pelanggaran.

130. Jenis-jenis pelanggaran berbasis seksual beragam dari satu distrik ke yang lainnya, seperti yang ditunjukkan dalam Bagan Jumlah Pelanggaran yang Tercatat, Berdasarkan Jenis dan Distrik, di bawah ini. Dari semua pelanggaran seksual di seluruh Timor yang dicatat oleh Komisi, pemerkosaan mencapai

46,1% (393/853), kekerasan seksual yang lain 27,1% (231/853), dan perbudakan seksual 26,8% (229/853). Pemerkosaan mencakup proporsi yang lebih besar dari pelanggaran seksual di Aileu dan Bobonaro dibandingkan dengan rata-rata nasional: masing-masing 71,9% (23/32) dan 66,2% (45/68). Sementara itu di Manufahi dan Ainaro perbudakan seksual adalah bagian terbesar dari pelanggaran berbasis seksual dibandingkan dengan rata-rata nasional: masing-masing 39,1% (34/87) dan 39,2% (40/102). Sama halnya, kekerasan seksual yang lain mencapai 57,9% (11/19) dan 51,4% (54/105) dari semua pelanggaran seksual yang tercatat di Liquiçá dan Lautém.

Jumlah pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

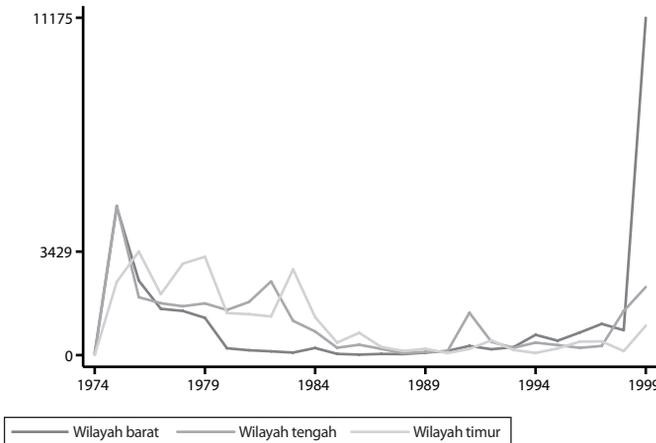
Pelanggaran nonfatal lintas ruang dan waktu

131. Secara garis besar kekerasan di Timor-Leste terjadi dalam fase-fase tersendiri, seperti yang dibahas di atas. Namun, pola-pola pelanggaran nonfatal selama fase pertama dan terakhir konflik berbeda-beda dari daerah ke daerah seperti yang tampak pada Bagan Jumlah Pelanggaran Nonfatal Berdasarkan Wilayah dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999. Secara khusus, kekerasan yang berkaitan dengan invasi awal Indonesia dan konflik partai pada 1975 lebih hebat di Wilayah-wilayah Barat dan Tengah dibandingkan daerah Wilayah Timur. Namun, dengan berlanjutnya pendudukan, pelanggaran nonfatal yang dilaporkan di Wilayah Barat menurun dari tingkat awalnya yang tinggi pada 1975 ke tingkat yang relatif rendah pada 1980, sedangkan di Wilayah Tengah kekerasan juga menurun setelah periode invasi awal menjadi kira-kira setengah dari yang terjadi pada 1975. Di Wilayah Timur tingkat kekerasan yang tercatat pada 1975 hanyalah sekitar setengah dari angka absolut yang dilaporkan di

Wilayah Barat dan Tengah. Akan tetapi, di seluruh penjuru Timor-Leste, selama akhir 1970-an dan awal 1980-an kekerasan berlanjut pada tingkat yang sama seperti yang terjadi pada 1976 tanpa penurunan berarti hingga 1984. Sementara kekerasan pada masa awal invasi Indonesia 1975 paling gencar terjadi di Wilayah Barat dan Tengah, setelah 1976 fokus kekerasan nonfatal beralih ke Wilayah Timur.

132. Tanpa memperhitungkan kejadian Santa Cruz dan masa setelahnya pada 1991 di Dili, kekerasan yang dilaporkan terjadi selama “tahun-tahun konsolidasi” dari 1984 hingga 1998 berlangsung dalam bentuk kekerasan tingkat rendah yang sporadis di ketiga wilayah tersebut. Selama fase akhir konflik pada 1999, 75,1% (9.494/12.634) dari pelanggaran nonfatal dilaporkan terjadi di Wilayah Barat. Data yang dimiliki Komisi sesuai dengan klaim yang menyatakan bahwa penduduk yang berada dekat dengan perbatasan Timor Barat dan Oecussi pada 1999 menjadi sasaran kekerasan dalam tingkat yang lebih tinggi ketika milisi pro-otonomi dan militer Indonesia menarik diri ke Timor Barat.

Jumlah pelanggaran nonfatal berdasarkan wilayah dalam lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Demografi usia - jenis kelamin korban untuk pelanggaran nonfatal yang dilaporkan

Pelaporan tingkat informasi usia dan jenis kelamin bagi korban

133. Komisi mempelajari beberapa hipotesis yang dapat menentukan apakah korban dijadikan sasaran atas dasar umur dan jenis kelamin. Bagian ini menerangkan pola demografis umur-jenis kelamin yang terlihat jelas berbeda-beda untuk korban pelanggaran nonfatal yang dilaporkan. Analisis ini hanya mencakup korban-korban yang umur dan jenis kelaminnya pada saat pelanggaran diketahui.

134. Dari 60.047 pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi, 34.047 (63,4%) pelanggaran memuat informasi umur yang pasti dari korban pelanggaran nonfatal yang teridentifikasi. Sayangnya tidak ada cara untuk memastikan penyebaran usia yang tidak dilaporkan untuk data ini. Karena itu tidaklah mungkin mengukur seberapa baik representasi penyebaran usia korban yang diketahui usianya untuk penyebaran usia keseluruhan korban yang dilaporkan.

135. Komisi menganggap bahwa seorang anak adalah siapa pun yang berumur di bawah 18 tahun. Definisi ini mengikuti definisi yang dinyatakan dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak.⁶ Mayoritas pelanggaran nonfatal, 89,8% (30.574/34.047), yang dicatat oleh Komisi di mana usia korbannya diketahui terjadi pada korban dewasa. 10,2% (3.473/34.047) pelanggaran yang dicatat oleh Komisi diderita korban anak.

136. Dari 60.047 pelanggaran nonfatal yang dicatat oleh Komisi, 99,4% (59.715/60.047) dilakukan terhadap korban yang jenis kelaminnya diketahui. Dari pelanggaran-pelanggaran ini 14,0% (8.355/59.715) dilakukan terhadap perempuan dan 86,0% (51.360/59.715) dilakukan terhadap laki-laki. 25,476 korban (termasuk mereka yang tidak diketahui jenis kelaminnya) mengalami pelanggaran-pelanggaran berikut ini: dari seluruh korban tersebut 15,7% (4.002/25.476) adalah perempuan dan 83,6% (21.308/25.476) adalah laki-laki.

137. Komisi mencatat 3.473 pelanggaran terhadap anak-anak, 3.451 di antaranya menyebutkan informasi tentang jenis kelamin anak-anak tersebut. Dari pelanggaran-pelanggaran ini, 27,5% (950/3.451) dilakukan terhadap anak perempuan dan 72,5% (2.501/3.451) dilakukan terhadap anak laki-laki. Terdapat 22 anak yang jenis kelaminnya tidak diketahui atau tidak dilaporkan oleh saksi. Dari 30.446 pelanggaran terhadap orang dewasa yang didokumentasi di mana jenis kelamin korban diketahui, 12,7% (3.870/30.446) adalah perempuan dan 87,3% adalah laki-laki. Dengan demikian, proporsi pelanggaran terhadap anak-anak perempuan yang didokumentasi lebih besar daripada proporsi pelanggaran terhadap perempuan dewasa yang didokumentasi. Oleh karena itu, baik korban dewasa maupun anak-anak cenderung adalah laki-laki. Dibanding dengan laki-laki, korban perempuan cenderung berusia lebih muda.

Analisis korban berdasarkan jenis kelamin

138. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan secara substansial berbeda. Tabel di bawah ini dengan jelas menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling banyak mengalami pelanggaran seksual: Komisi mencatat bahwa untuk setiap pelanggaran berbasis seksual terhadap laki-laki terjadi sepuluh pelanggaran terhadap perempuan. Sedangkan untuk setiap siksaan dan kekerasan paksa terhadap korban perempuan, Komisi mencatat sekitar 12 atau 13 tindak kekerasan dan kekerasan paksa dilakukan terhadap laki-laki. Jenis-jenis pelanggaran yang lain, contohnya ancaman, pelanggaran hak milik dan ekonomi, penganiayaan dan penahanan, dicatat dalam proporsi rata-rata sekitar 5.8 korban laki-laki untuk setiap korban perempuan.

| Jenis Pelanggaran | Pelanggaran terhadap Laki-laki | Pelanggaran terhadap Perempuan | Pelanggaran terhadap korban dengan jenis kelamin yang tak tercatat | % Korban perempuan | Proporsi korban lelaki terhadap perempuan | Total |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|---|--------|
| Pelanggaran properti/ekonomi | 3.792 | 908 | 35 | 19,2 | 4,2 | 4.735 |
| Pelanggaran integritas fisik | 10.205 | 1.247 | 64 | 10,8 | 8,2 | 11.516 |
| | 15.602 | 2.678 | 94 | 14,6 | 5,8 | 18.374 |
| Penahanan | 21.687 | 3.521 | 139 | 13,9 | 6,2 | 25.347 |
| | 51.286 | | | | | 59.972 |

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

139. Dalam tabel di bawah ini, dianalisis pola korban menurut jenis kelamin lintas waktu. Ada variasi yang signifikan antara rasio korban laki-laki terhadap korban perempuan selama tahun-tahun konflik: rasio laki-laki terhadap perempuan bervariasi antara yang terendah 2,7 pada 1981 hingga yang tertinggi 43,1 pada 1991. Rasio laki-laki atas perempuan yang lebih tinggi daripada rasio rata-rata dicatat pada 1975, 1987, dan 1999. Temuan-temuan ini sesuai dengan hipotesa bahwa banyak perempuan dibawa ke Atauro 1981, dan juga bahwa tindakan represif dari kekuatan militer Indonesia setelah kejadian Santa Cruz kebanyakan diarahkan kepada laki-laki.

| Tahun | Pelanggaran terhadap Laki-laki | Pelanggaran terhadap Perempuan | Pelanggaran terhadap Korban dengan Jenis Kelamin yang Tak Tercatat | % Korban Perempuan | Proporsi Korban Lelaki terhadap Perempuan | Total |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|---|-------|
| 1974 | 94 | 0 | 0 | 0,0 | | 94 |
| 1975 | 5.526 | 489 | 29 | 8,1 | 11,3 | 6.044 |
| 1976 | 2.986 | 554 | 13 | 15,6 | 5,4 | 3.553 |
| 1977 | 2.287 | 352 | 30 | 13,2 | 6,5 | 2.669 |
| 1978 | 2.516 | 523 | 23 | 17,1 | 4,8 | 3.062 |
| 1979 | 3.471 | 633 | 23 | 15,3 | 5,5 | 4.127 |

| | | | | | | |
|------|--------|-------|----|------|------|--------|
| 1980 | 2.071 | 389 | 20 | 15,7 | 5,3 | 2.480 |
| 1981 | 1.768 | 664 | 7 | 27,2 | 2,7 | 2.439 |
| 1982 | 2.440 | 708 | 4 | 22,5 | 3,4 | 3.152 |
| 1983 | 2.949 | 679 | 41 | 18,5 | 4,3 | 3.669 |
| 1984 | 1.788 | 239 | 2 | 11,8 | 7,5 | 2.029 |
| 1985 | 532 | 128 | 0 | 19,4 | 4,2 | 660 |
| 1986 | 856 | 204 | 2 | 19,2 | 4,2 | 1.062 |
| 1987 | 430 | 41 | 0 | 8,7 | 10,5 | 471 |
| 1988 | 189 | 16 | 0 | 7,8 | 11,8 | 205 |
| 1989 | 311 | 20 | 11 | 5,8 | 15,6 | 342 |
| 1990 | 302 | 7 | 8 | 2,2 | 43,1 | 317 |
| 1991 | 1.658 | 185 | 6 | 10,0 | 9,0 | 1.849 |
| 1992 | 1.009 | 54 | 20 | 5,0 | 18,7 | 1.083 |
| 1993 | 551 | 84 | 2 | 13,2 | 6,6 | 637 |
| 1994 | 974 | 158 | 14 | 13,8 | 6,2 | 1.146 |
| 1995 | 927 | 38 | 6 | 3,9 | 24,4 | 971 |
| 1996 | 1.170 | 154 | 6 | 11,6 | 7,6 | 1.330 |
| 1997 | 1.580 | 123 | 1 | 7,2 | 12,8 | 1.704 |
| 1998 | 2.075 | 164 | 4 | 7,3 | 12,7 | 2.243 |
| 1999 | 10.826 | 1.748 | 60 | 13,8 | 6,2 | 12.634 |
| | 51.286 | | | | | 59.972 |

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

140. Meskipun perincian untuk tiap distrik menunjukkan lebih sedikit variasi rasio laki-laki atas perempuan lintas ruang daripada menurut lintas waktu, rasio yang lebih tinggi dari rata-rata tercatat di Liquiçá (11,4), Oecussi (9,4), Aileu (8,3), dan Dili (8,2), sedangkan Lautém (3,7), Ainaro (4,5), dan Ermera (4,5) mencatat rasio laki-laki terhadap perempuan yang lebih rendah dari rata-rata. Temuan-temuan ini tampak pada tabel di bawah ini.

| Distrik | Pelanggaran terhadap Laki-laki | Pelanggaran terhadap Perempuan | Pelanggaran terhadap Korban dengan Jenis Kelamin yang Tak Tercatat | % Korban Perempuan | Proporsi Korban Lelaki terhadap Korban Perempuan | Total |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|--|--------|
| Lautém | 3.915 | 1.069 | 20 | 21,4 | 3,7 | 5.004 |
| Viqueque | 4.766 | 685 | 46 | 12,5 | 7,0 | 5.497 |
| Baucau | 4.049 | 745 | 42 | 15,4 | 5,4 | 4.836 |
| Manatuto | 2.566 | 511 | 28 | 16,5 | 5,0 | 3.105 |
| Manufahi | 4.829 | 621 | 24 | 11,3 | 7,8 | 5.474 |
| Aileu | 2.934 | 352 | 28 | 10,6 | 8,3 | 3.314 |
| Ermera | 4.872 | 1.086 | 23 | 18,2 | 4,5 | 5.981 |
| Liquiçá | 2.475 | 217 | 5 | 8,0 | 11,4 | 2.697 |
| Dili | 7.441 | 906 | 42 | 10,8 | 8,2 | 8.389 |
| Ainaro | 3.034 | 681 | 12 | 18,3 | 4,5 | 3.727 |
| Covalima | 2.624 | 426 | 20 | 13,9 | 6,2 | 3.070 |
| Oecussi | 3.057 | 325 | 16 | 9,6 | 9,4 | 3.398 |
| Bobonaro | 4.097 | 631 | 24 | 13,3 | 6,5 | 4.752 |
| Indonesia | 627 | 99 | 2 | 13,6 | 6,3 | 728 |
| | 51.286 | | | | | 59.972 |

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

Analisis korban berdasarkan umur

141. Bagian ini membahas usia korban berdasarkan jenis pelanggaran, waktu, dan tempat terjadinya pelanggaran.

142. Angka pelanggaran spesifik terhadap korban dewasa dan anak-anak tampak pada tabel di bawah ini. Dalam hampir semua jenis pelanggaran yang dicatat Komisi, untuk setiap pelanggaran terhadap anak, terjadi sekitar 7-10 pelanggaran terhadap orang dewasa. Namun, proporsi pelanggaran seksual terhadap korban dewasa dibandingkan korban anak-anak secara substansial lebih rendah daripada jenis-jenis pelanggaran yang lain: untuk setiap pelanggaran seksual terhadap anak yang dicatat Komisi, terjadi 3,4 pelanggaran terhadap orang dewasa. Karena itu, rasio dewasa terhadap anak untuk pelanggaran seksual adalah sekitar 2,5 kali lebih rendah daripada pelanggaran nonfatal yang lain.

| Jenis Pelanggaran | Pelanggaran terhadap Orang Dewasa | Pelanggaran terhadap Anak-anak | Pelanggaran terhadap Korban dengan Umur yang Tak Tercatat | % Korban Anak-anak | Proporsi Korban Dewasa terhadap Anak-anak | Total |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|---|--------|
| Pelanggaran Properti/ Ekonomi | 2.882 | 323 | 1.530 | 6,8 | 8,9 | 4.735 |
| Pelanggaran terhadap Integritas Fisik | 6.255 | 639 | 4.622 | 5,5 | 9,8 | 11.516 |
| | 9.543 | 1.088 | 7.743 | 5,9 | 8,8 | 18.374 |
| Penahanan | 11.849 | 1.427 | 12.071 | 5,6 | 8,3 | 25.347 |
| | | | 25.966 | | | 59.972 |

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

143. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah pelanggaran terhadap orang dewasa dan anak-anak berdasarkan tahun. Data Komisi tentang pelanggaran nonfatal secara umum menunjukkan peningkatan dalam rasio orang dewasa terhadap anak-anak selama masa tersebut, yakni bahwa jumlah korban dewasa dibanding korban anak-anak lebih besar di pengujung konflik. Namun, karena secara substansial cukup banyak korban dari masa awal konflik tidak tercatat umurnya, sulit membuat perbandingan antara rasio korban dewasa atas anak pada periode awal dan rasio pada akhir konflik tersebut.

| Tahun | Pelanggaran terhadap Orang Dewasa | Pelanggaran terhadap Anak-anak | Pelanggaran terhadap Korban dengan Umur yang Tak Tercatat | % Korban Anak-anak | Proporsi Korban Dewasa terhadap Anak-anak | Total |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|---|-------|
| 1974 | 5 | 0 | 89 | 0,0 | | 94 |
| 1975 | 2.616 | 402 | 3.026 | 6,7 | 6,5 | 6.044 |
| 1976 | 1.582 | 293 | 1.678 | 8,2 | 5,4 | 3.553 |
| 1977 | 1.087 | 185 | 1.397 | 6,9 | 5,9 | 2.669 |
| 1978 | 1.302 | 226 | 1.534 | 7,4 | 5,8 | 3.062 |
| 1979 | 2.015 | 260 | 1.852 | 6,3 | 7,8 | 4.127 |

| | | | | | | |
|------|-------|-----|--------|------|------|--------|
| 1980 | 1.155 | 173 | 1.152 | 7,0 | 6,7 | 2.480 |
| 1981 | 1.174 | 293 | 972 | 12,0 | 4,0 | 2.439 |
| 1982 | 1.381 | 199 | 1.572 | 6,3 | 6,9 | 3.152 |
| 1983 | 1.653 | 200 | 1.816 | 5,5 | 8,3 | 3.669 |
| 1984 | 1.017 | 78 | 934 | 3,8 | 13,0 | 2.029 |
| 1985 | 307 | 40 | 313 | 6,1 | 7,7 | 660 |
| 1986 | 527 | 93 | 442 | 8,8 | 5,7 | 1.062 |
| 1987 | 194 | 27 | 250 | 5,7 | 7,2 | 471 |
| 1988 | 121 | 6 | 78 | 2,9 | 20,2 | 205 |
| 1989 | 234 | 17 | 91 | 5,0 | 13,8 | 342 |
| 1990 | 196 | 45 | 76 | 14,2 | 4,4 | 317 |
| 1991 | 1.099 | 62 | 688 | 3,4 | 17,7 | 1.849 |
| 1992 | 509 | 28 | 546 | 2,6 | 18,2 | 1.083 |
| 1993 | 308 | 47 | 282 | 7,4 | 6,6 | 637 |
| 1994 | 568 | 53 | 525 | 4,6 | 10,7 | 1.146 |
| 1995 | 457 | 43 | 471 | 4,4 | 10,6 | 971 |
| 1996 | 680 | 39 | 611 | 2,9 | 17,4 | 1.330 |
| 1997 | 1.073 | 88 | 543 | 5,2 | 12,2 | 1.704 |
| 1998 | 1.070 | 55 | 1.118 | 2,5 | 19,5 | 2.243 |
| 1999 | 8.199 | 525 | 3.910 | 4,2 | 15,6 | 12.634 |
| | | | 25.966 | | | 59.972 |

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

144. Komisi mencatat rata-rata 8,8 korban dewasa untuk setiap satu korban anak. Namun demikian, ada variasi dalam rasio korban dewasa terhadap anak antardistrik, seperti yang tampak pada tabel di bawah ini. Di Bobonaro jumlah korban anak yang tercatat relatif tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh rasio dewasa-anak 4,8, sementara di Covalima, Indonesia, dan Oecussi dicatat rasio korban dewasa-anak jelas lebih besar dari rata-rata.*

* Rata-rata, perbandingan korban orang dewasa terhadap anak-anak tercatat oleh Komisi adalah 17.3 di Covalima, 15.3 di Indonesia, dan 14.1 di Oecussi.

Tabel 18: Pola korban menurut usia per distrik

| Distrik | Pelanggaran terhadap Orang Dewasa | Pelanggaran terhadap Anak-anak | Pelanggaran terhadap Korban dengan Umur yang Tak Tercatat | % Korban Anak-anak | Proporsi Korban Dewasa terhadap Anak-anak | Total |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|---|--------|
| Lautém | 2.498 | 347 | 2.159 | 6,9 | 7,2 | 5.004 |
| Viqueque | 2.119 | 226 | 3.152 | 4,1 | 9,4 | 5.497 |
| Baucau | 2.597 | 314 | 1.925 | 6,5 | 8,3 | 4.836 |
| Manatuto | 1.347 | 191 | 1.567 | 6,2 | 7,1 | 3.105 |
| Manufahi | 2.505 | 246 | 2.723 | 4,5 | 10,2 | 5.474 |
| Aileu | 1.488 | 166 | 1.660 | 5,0 | 9,0 | 3.314 |
| Ermera | 3.107 | 315 | 2.559 | 5,3 | 9,9 | 5.981 |
| Liquiçá | 1.810 | 166 | 721 | 6,2 | 10,9 | 2.697 |
| Dili | 4.089 | 448 | 3.852 | 5,3 | 9,1 | 8.389 |
| Ainaro | 1.811 | 232 | 1.684 | 6,2 | 7,8 | 3.727 |
| Covalima | 1.942 | 112 | 1.016 | 3,6 | 17,3 | 3.070 |
| Oecussi | 2.278 | 161 | 959 | 4,7 | 14,1 | 3.398 |
| Bobonaro | 2.510 | 525 | 1.717 | 11,0 | 4,8 | 4.752 |
| Indonesia | 428 | 28 | 272 | 3,8 | 15,3 | 728 |
| | | | 25.966 | | | 59.972 |

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

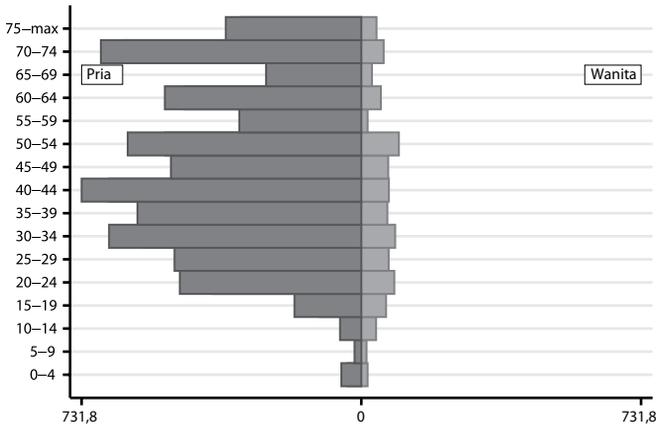
Analisis korban berdasarkan umur dan jenis kelamin

145. Bagian ini menggambarkan distribusi korban berdasarkan baik umur maupun jenis kelamin. Analisis ini ditunjukkan dalam jumlah dan perbandingan berdasarkan populasi dari tiap jenis pelanggaran. Perbandingan berdasarkan penduduk dihitung menggunakan hasil Sensus Penduduk Indonesia 1990.⁷

146. Bagan Tingkat Penahanan Spesifik Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 – 1999; Tingkat Penyiksaan Spesifik Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 – 1999; dan Tingkat Penganiayaan Spesifik Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 – 1999 menunjukkan jumlah pelanggaran berdasarkan umur dan jenis kelamin untuk penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan. Jumlah distribusi umur-jenis kelamin yang didokumentasi untuk ketiga jenis pelanggaran ini sungguh

serupa, dan masing-masing menunjukkan bahwa kelompok korban yang paling banyak tercatat untuk jenis-jenis pelanggaran ini adalah laki-laki muda dalam usia dinas militer. Sangat sedikit tindak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang tercatat dialami oleh korban perempuan.

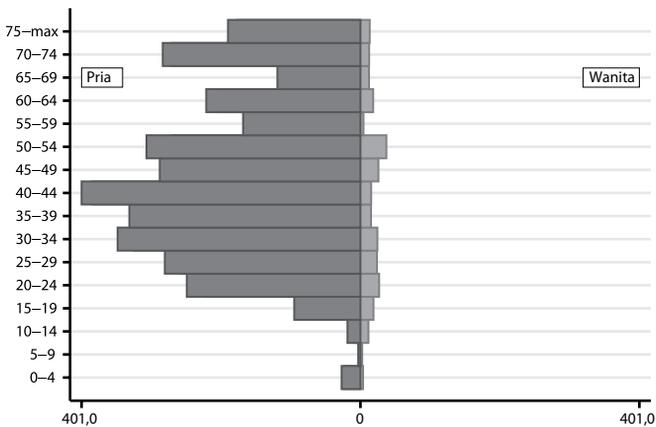
Tingkat penahanan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia

Catatan: 47,8% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

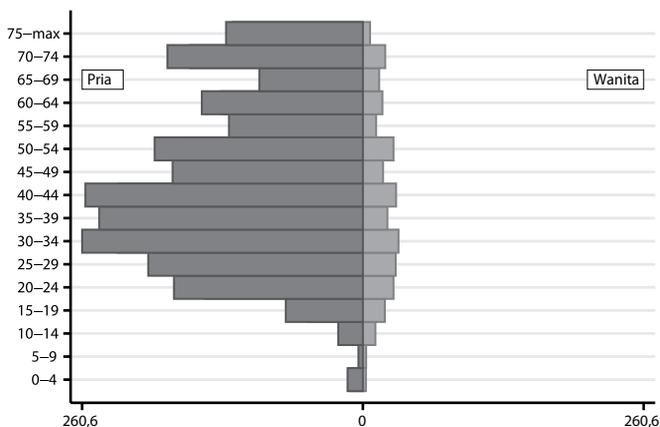
Tingkat penyiksaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia

Catatan: 40,6% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

Tingkat penganiayaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999

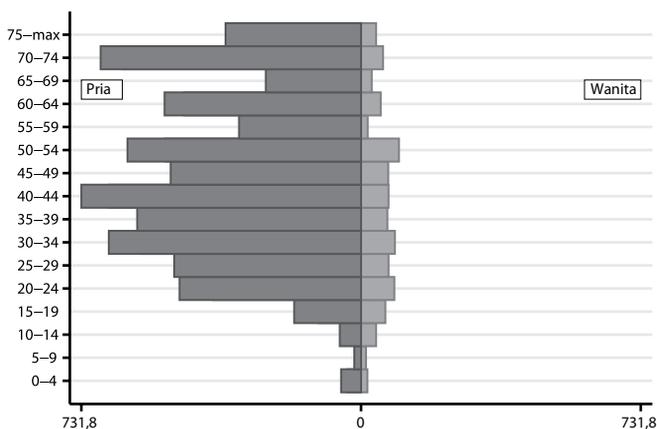


Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia

Catatan: 42,0% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

147. Ketika beralih dari hitungan pelanggaran sederhana ke hitungan pelanggaran berbasis penduduk, terlihat bahwa relatif terhadap keseluruhan penduduk Timor, laki-laki paruhbaya mengalami tingkat tertinggi bentuk-bentuk kekerasan ini. Lebih jauh lagi, lelaki tua di atas 70 tahun mengalami bentuk-bentuk kekerasan ini pada tingkat yang serupa dengan yang dialami lelaki paruhbaya. Pola-pola ini tampak pada Bagan Tingkat Penahanan Spesifik Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 -1999; Tingkat Penyiksaan Spesifik Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 -1999; dan Tingkat Penganiayaan Spesifik Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 -1999.

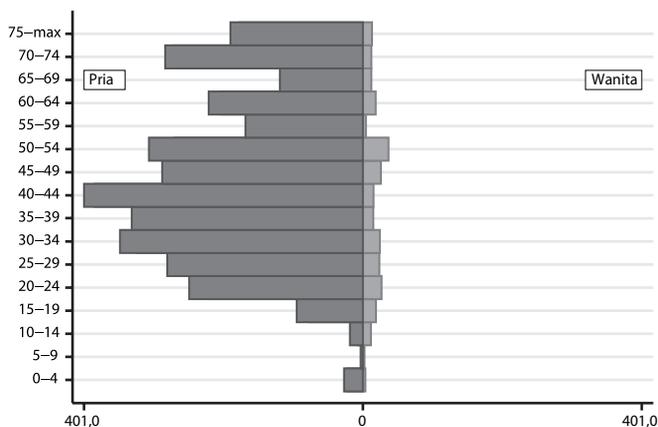
Tingkat penahanan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia

Catatan: 47,8% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

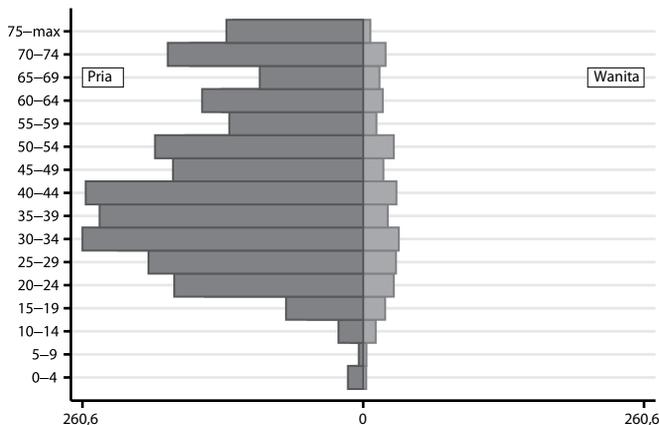
Tingkat penyiksaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia

Catatan: 40,6% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

Tingkat penganiayaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



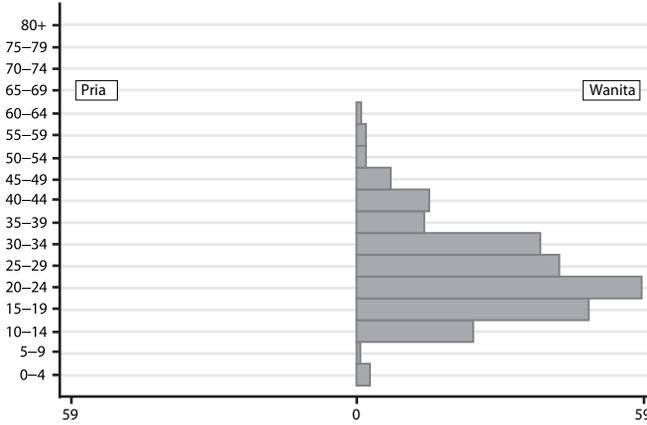
Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia

Catatan: 42,0% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

148. Penyebaran umur-jenis kelamin para korban pelanggaran seksual yang dicatat oleh Komisi secara substansial berbeda dari penyebaran umur-jenis kelamin pelanggaran integritas fisik. Hal ini tampak pada Bagan Jumlah Tindak Pemerkosaan yang Tercatat, Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin, 1974 -1999; dan Tingkat Pemerkosaan Spesifik Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 -1999. Lebih lanjut, ada perbedaan-perbedaan nyata dalam penyebaran umur-jenis

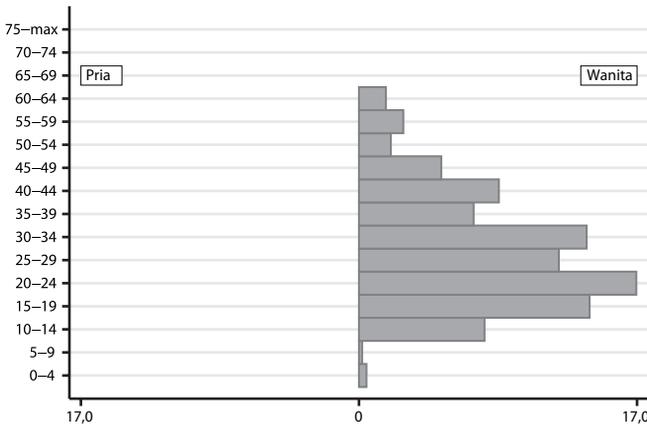
kelamin untuk berbagai bentuk pelanggaran seksual. Komisi mendokumentasikan pemerkosaan perempuan dalam semua kategori umur di bawah 65 tahun. Namun, frekuensi tertinggi pemerkosaan yang tercatat dan tingkat tertinggi pemerkosaan berdasarkan populasi adalah pada perempuan muda dalam usia reproduksi. Perempuan berusia 15 – 24 tahun tampaknya telah menjadi subpopulasi yang berisiko tertinggi mengalami pemerkosaan.

Jumlah tindak pemerkosaan yang tercatat berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
 Catatan: 34,9% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

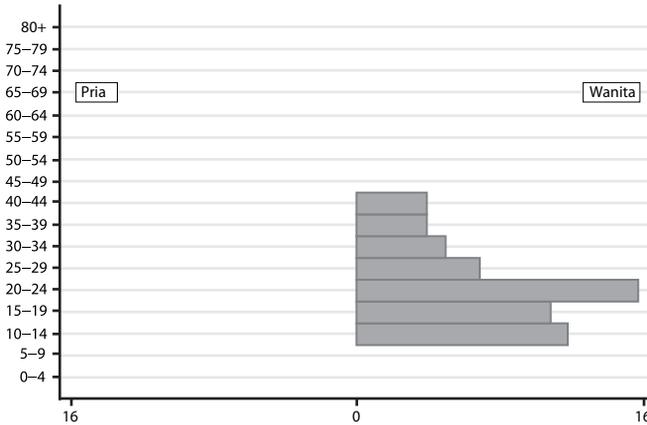
Tingkat pemerkosaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR ; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia
 Catatan: 34,9% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

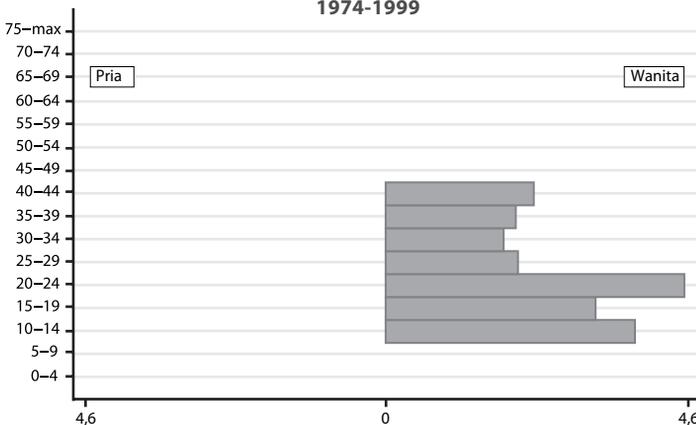
149. Di samping itu, para perempuan berusia antara 10 dan 44 dicatat sebagai korban perbudakan seksual. Dari korban-korban ini perempuan antara usia 20 dan 24 tahun adalah yang jumlahnya paling banyak dan tingkatnya paling tinggi dalam hal perbudakan seksual. Seperti halnya pemerkosaan, tidak ada kasus perbudakan seksual terhadap laki-laki yang didokumentasi oleh Komisi.

Tingkat perbudakan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
 Catatan: 39,8% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

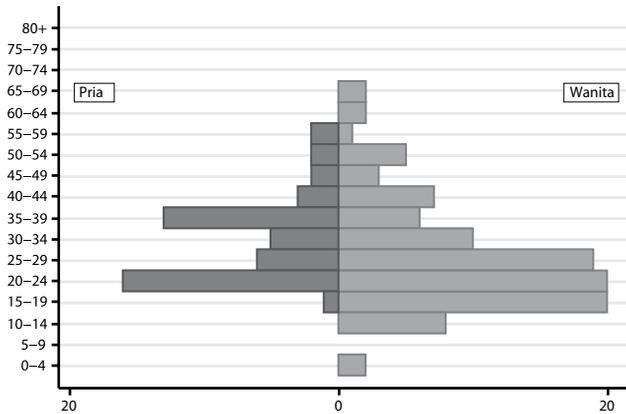
Tingkat perbudakan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia
 Catatan: 39,8% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

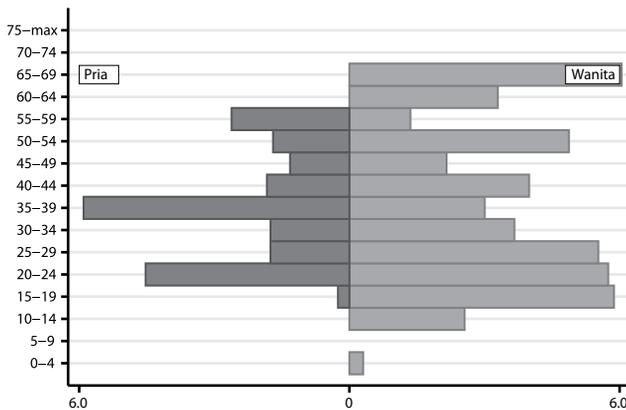
150. Namun demikian Komisi mencatat kasus-kasus kekerasan seksual lain baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Bentuk kekerasan ini paling umum terjadi pada laki-laki dalam kelompok umur 20 – 24 dan 35 – 39 dan pada perempuan antara umur 15 dan 29 tahun.

Jumlah kekerasan seksual yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
 Catatan: 29,9% data pelanggaran tidak merekam usia dan jenis kelamin korban

Tingkat kekerasan seksual spesifik usia dan jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia
 Catatan: 29,9% data pelanggaran tidak merekam usia dan jenis kelamin korban

151. Oleh karena itu, analisis kuantitatif Komisi menunjukkan bahwa mayoritas yang sangat besar dari korban pelanggaran seksual adalah perempuan muda usia. Lebih lanjut lagi, pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilaporkan hanya dialami oleh perempuan.

Perbandingan antara pemantauan Hak Asasi Manusia retrospektif dan pemantauan dalam masa yang sama

152. Bagian ini membandingkan cakupan dan pola pelanggaran nonfatal yang dilaporkan oleh Komisi dengan tingkat dan pola pelanggaran nonfatal yang dilaporkan oleh Amnesty International. Bagian ini menggambarkan betapa terisolasinya Timor-Leste saat itu dari komunitas internasional dan kurangnya informasi serta terbatasnya pengetahuan mengenai pelanggaran di Timor selama periode awal serta yang paling keras dari seluruh konflik.

153. Seperti yang dibahas di atas, akses ke wilayah Timor-Leste selama masa pendudukan Indonesia sangat terbatas, khususnya bagi kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International (AI). Sebagai akibatnya, cakupan geografis laporan-laporan Amnesty International pada masa itu cukup banyak berbeda dengan apa yang dilaporkan kepada Komisi dan Fokupers dalam proses pengambilan pernyataan retrospektif (di kemudian hari) untuk masa yang sama.

154. 35,6% (1.953/5.479) dari pelanggaran nonfatal yang dicatat oleh Amnesty International tidak mengandung informasi tentang tempat terjadinya masing-masing pelanggaran, seperti yang tampak pada Tabel Distribusi Data di bawah ini. Hal ini tampaknya sesuai dengan arus informasi yang terbatas yang keluar dari Timor-Leste selama masa pendudukan (khususnya dari desa-desa dan kecamatan-kecamatan terpencil di pegunungan). Lebih lanjut, sifat pelaporan kepada komunitas internasional pada masa itu lebih berfokus pada laporan tentang situasi hak asasi manusia di Timor-Leste bukan pada penggambaran kondisi yang berbeda dari berbagai wilayah di Timor-Leste. Namun, 32,3% (1.770/5.479) dari keseluruhan pelanggaran nonfatal yang dilaporkan oleh Amnesty International terjadi di Dili—suatu proporsi yang lebih tinggi daripada yang dilaporkan proyek retrospektif CAVR dan Fokupers, yang menyatakan bahwa pelanggaran di Dili mencapai 14,0% (8.389/59.972) dan 4,6% (36/788) .

Tabel 19: Tabel distribusi data berdasarkan data CAVR, Fokupers, Amnesty International

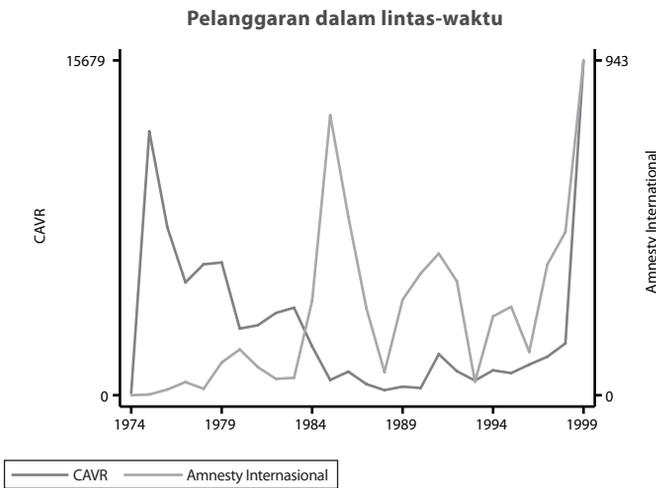
| Distrik | Basis Data Pernyataan CAVR | Basis Data Amnesty | Basis Data Fokupers | % CAVR | % Amnesty | % Fokupers |
|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------|------------|
| Lautém | 5.004 | 6 | 111 | 8,3 | 2,0 | 0,8 |
| Viqueque | 5.497 | 6 | 114 | 9,2 | 2,1 | 0,8 |
| Baucau | 4.836 | 1 | 210 | 8,1 | 3,8 | 0,1 |
| Manatuto | 3.105 | 27 | 22 | 5,2 | 0,4 | 3,4 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|
| Manufahi | 5.474 | 63 | 60 | 9,1 | 1,1 | 8,0 |
| Aileu | 3.314 | 18 | 57 | 5,5 | 1,0 | 2,3 |
| Ermera | 5.981 | 113 | 25 | 10,0 | 0,5 | 14,3 |
| Liquiçá | 2.697 | 88 | 246 | 4,5 | 4,5 | 11,2 |
| Dili | 8.389 | 36 | 1.770 | 14,0 | 32,3 | 4,6 |
| Ainaro | 3.727 | 84 | 54 | 6,2 | 1,0 | 10,7 |
| Covalima | 3.070 | 90 | 65 | 5,1 | 1,2 | 11,4 |
| Oecussi | 3.398 | 10 | 19 | 5,7 | 0,3 | 1,3 |
| Bobonaro | 4.752 | 190 | 184 | 7,9 | 3,4 | 24,1 |
| Indonesia | 728 | 52 | 589 | 1,2 | 10,8 | 6,6 |
| Distrik yang Tak Diketahui | 0 | 4 | 1.953 | 0,0 | 35,6 | 0,5 |
| | 59.972 | 788 | 5.479 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Sumber: Basis Data Pernyataan serta Laporan CAVR, Fokupers, dan Amnesty Internasional

155. Seperti yang diisyaratkan dalam Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu di bawah ini, laporan-laporan Amnesty International yang dibuat dekat dengan masa kejadian menunjukkan tiga gelombang penahanan yang jelas atas individu yang diketahui identitasnya—yakni yang terjadi pada 1985 (terhadap 402 orang), 1989 – 1993 (891 orang), dan 1994 – 1999 (811 orang). Sedangkan laporan retrospektif yang diberikan kepada Komisi menyebutkan jumlah terbanyak penahanan sewenang-wenang terjadi pada 1999 dan sekitar 1975 – 1984. Lebih lanjut lagi, laporan-laporan ini menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 2.779 penahanan terjadi pada 1999 dan sedikitnya 16.509 penahanan terjadi antara 1975 dan 1984. Perbandingan-perbandingan ini adalah bukti tentang sulitnya mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste selama masa pendudukan Indonesia. Secara khusus, Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu ini menunjukkan bahwa meskipun kelompok-kelompok internasional hak asasi manusia, seperti Amnesty International, secara seksama mencatat situasi hak asasi manusia di Timor-Leste sepanjang dasawarsa 1980 dan 1990, pelaporan yang dilakukan jauh lebih rendah daripada skala keseluruhan kekerasan nonfatal yang sebenarnya pada waktu itu. Bagan ini juga menunjukkan perbedaan yang mencolok antara pemahaman yang dapat diperoleh dari laporan retrospektif dibanding dengan laporan dibuat pada masa kejadiannya mengenai tahun-tahun awal invasi: Dari seluruh pelanggaran yang didokumentasi oleh Amnesty International, 10,9% (734/6,717) terjadi pada tahun-tahun awal invasi antara 1975 dan 1984. Sedangkan dari pelanggaran yang dilaporkan kepada Komisi, 64,0% (47,390/74,024) terjadi antara 1975 dan 1984.

Mengingat bahwa pelaporan kepada Komisi juga telah mengalami ‘kehilangan ingatan’ (karena sebagian orang yang dapat melaporkan pelanggaran di tahun-tahun awal invasi telah meninggal selama 1980-an dan ‘90-an), maka di dalam data narasi pernyataan yang ada pada Komisi pun telah mengalami bias waktu sehingga mengurangi laporan pelanggaran yang terjadi di tahun-tahun awal mandat Komisi. Komisi menyimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi antara 1975 sampai 1984 sangat kurang dilaporkan pada masa kejadiannya ketika dibanding dengan pola dan besarnya pelanggaran secara umum. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses ke Timor-Leste.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

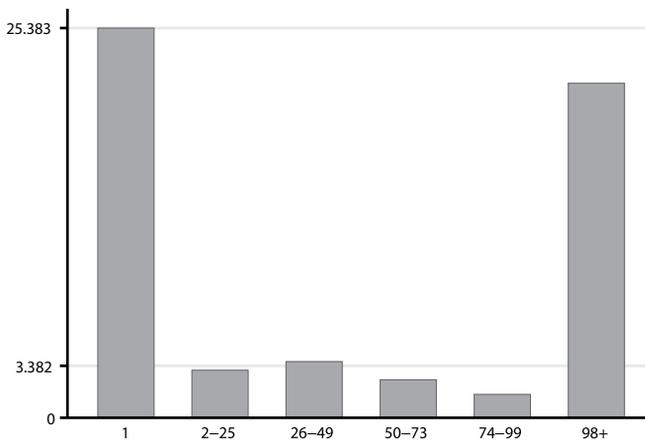
Sifat pelanggaran terhadap individu dan kelompok

156. Sebagian pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi dilakukan terhadap seorang individu, sementara sebagian pelanggaran lainnya dilaporkan dilakukan terhadap lebih daripada satu orang pada waktu yang sama. Bagan Jumlah Korban Tindakan Penahanan Berdasarkan Ukuran Kelompok Korban, 1974 – 1999; Bagan Jumlah Korban Tindakan Penyiksaan Berdasarkan Ukuran Kelompok Korban, 1974 – 1999; dan Bagan Jumlah Korban Tindakan Penganiayaan Berdasarkan Ukuran Kelompok Korban, 1974 – 1999 memperlihatkan distribusi pelanggaran sesuai besar kelompok korban, untuk penyiksaan, penahanan, dan penganiayaan.*

* Seperti halnya kasus pelanggaran terhadap korban perseorangan, pelanggaran terhadap korban dalam kelompok bisa dilaporkan oleh lebih dari satu orang deponen. Komisi mencocokkan catatan korban berkelompok untuk mengidentifikasi laporan yang dilaporkan lebih dari satu kali untuk pelanggaran yang sama dan korban disebutkan oleh beberapa pernyataan yang berbeda-beda. Metode yang digunakan untuk pencocokan ini diuraikan dalam Lampiran Statistik.

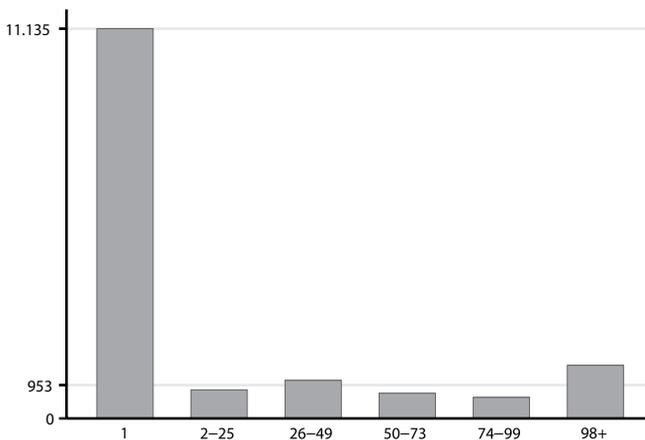
157. Sifat dari pelanggaran yang dilakukan terhadap satu orang cenderung berbeda dengan sifat pelanggaran terhadap kelompok. Seperti tampak pada Bagan Jumlah Korban Tindakan Penahanan Berdasarkan Ukuran Kelompok Korban, 1974 – 1999 dan Bagan Jumlah Korban Tindakan Penganiayaan Berdasarkan Ukuran Kelompok Korban, 1974 – 1999, penahanan sewenang-wenang dan penganiayaan lebih umum dilaporkan terjadi terhadap individu atau kelompok yang terdiri dari 50 orang atau lebih, sedangkan lebih sedikit orang pernah ditahan atau mengalami penganiayaan dalam kelompok yang terdiri dari 2 – 49 orang. Hampir semua tindakan penyiksaan dilaporkan dilakukan terhadap korban individu satu per satu. Temuan empiris ini sesuai dengan hipotesis bahwa penyiksaan adalah bentuk penindasan yang digunakan dengan lebih bersasaran (lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan).

Jumlah korban tindakan penahanan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974-1999



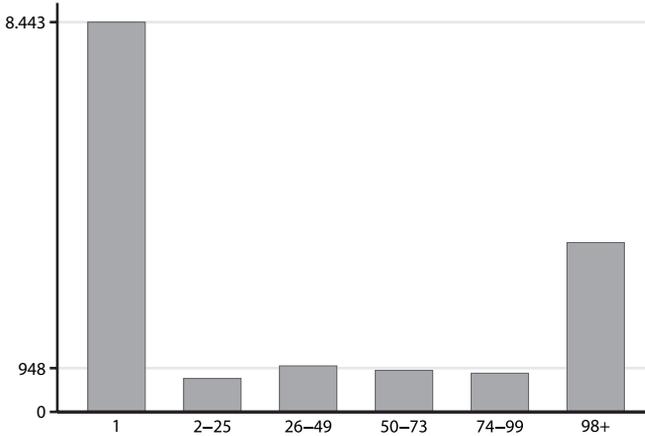
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah korban tindakan penyiksaan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah korban tindakan penganiayaan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

158. Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999 memperlihatkan bahwa dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi, penahanan korban individu dan korban kelompok berkorelasi positif. Ketika penahanan yang dilaporkan terhadap korban individu meningkat, begitu pula penahanan yang dilaporkan terhadap korban kelompok.[†] Lebih lanjut, ada perbedaan substansial antara tingkat penahanan individu dan penahanan kelompok yang dilaporkan. Antara 1974 dan 1984 penahanan yang dilaporkan terhadap korban kelompok hampir selalu lebih tinggi daripada penahanan atas korban individu.[†] Ada dua kemungkinan penjelasan untuk pola ini, yakni:

- Polanya bisa mencerminkan karakteristik yang makin bersasaran dari praktik-praktik penahanan yang dilakukan militer Indonesia selama masa pendudukan dan peningkatan kemampuan mereka pada dasawarsa 1980 dan 1990 dalam menargetkan individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerakan Resistansi, atau
- Para deponen CAVR mungkin mengalami lebih banyak kesulitan untuk secara spesifik mengidentifikasi tahanan individual yang ditawan pada masa awal pendudukan dibandingkan pada masa akhir. Akibatnya, pelaporan para deponen mengenai periode awal lebih banyak menyebutkan penahanan terhadap kelompok-kelompok tanpa nama.

* Koefisien korelasinya adalah 0,74.

† Satu-satunya tahun dalam periode itu saat penahanan terhadap korban kelompok lebih rendah daripada penahanan yang dilaporkan terhadap korban individu adalah 1983.



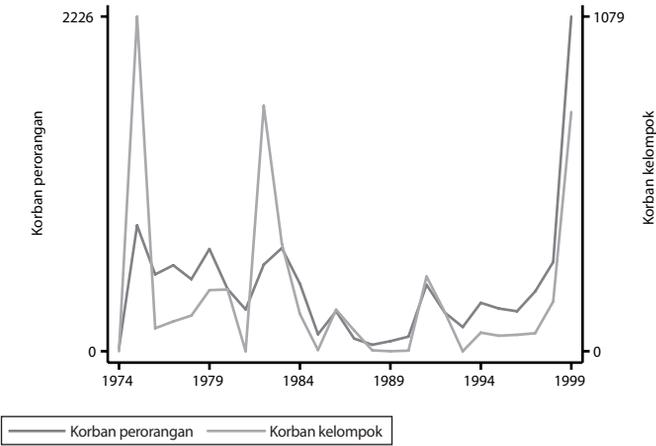
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

159. Namun, agaknya pola penahanan yang dilaporkan tidak dibentuk oleh daya ingat para deponen, karena tidak satu pun jenis pelanggaran lain (yaitu penyiksaan, penganiayaan, ancaman, dan pelanggaran harta benda) memperlihatkan bukti dari bias ingatan seperti ini—seperti diperlihatkan oleh Bagan Jumlah Tindakan Penyiksaan yang Tercatat, dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999, Pelanggaran dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999, Jumlah Tindakan Pengancaman yang Tercatat, dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999, dan Jumlah Tindakan Kekerasan Berbasis Seksual yang Tercatat, dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999. Karena itu bukti statistik tentang penahanan yang didokumentasikan oleh Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa praktik-praktik penahanan militer Indonesia berubah dari fokus pada korban individu dan kelompok pada tahun-tahun dari 1977 sampai 1984 menuju ke strategi lebih bersasaran yang berfokus pada tahanan individu mulai 1985 sampai 1999.

160. Bukti statistik Komisi juga memperlihatkan korelasi positif antara tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap korban kelompok dan korban individu sepanjang waktu.* Lebih jauh, seperti diperlihatkan dalam Bagan Jumlah Tindakan Penyiksaan yang Tercatat, dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999, puncak-puncak tindakan penyiksaan yang dilaporkan terhadap korban kelompok terjadi pada 1975, 1982, dan 1999. Oleh karena itu, data Komisi menengarai bahwa jumlah terbesar kekerasan terhadap kelompok terjadi dengan cara yang sangat terkonsentrasi pada saat-saat tertentu.

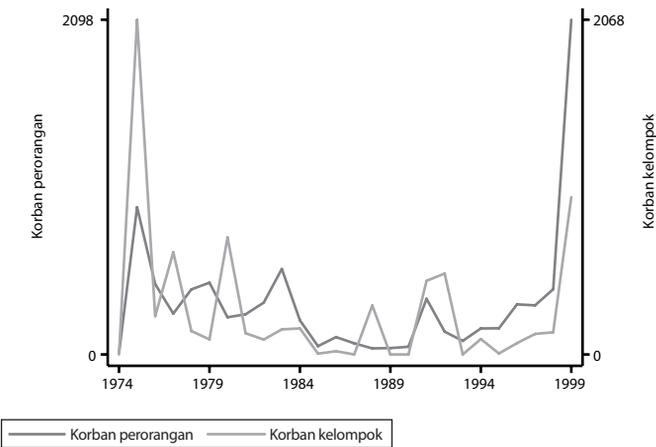
* Koefisien korelasinya adalah 0,69.

Jumlah tindakan penyiksaan yang tercatat dalam lintas-waktu, 1974-1999



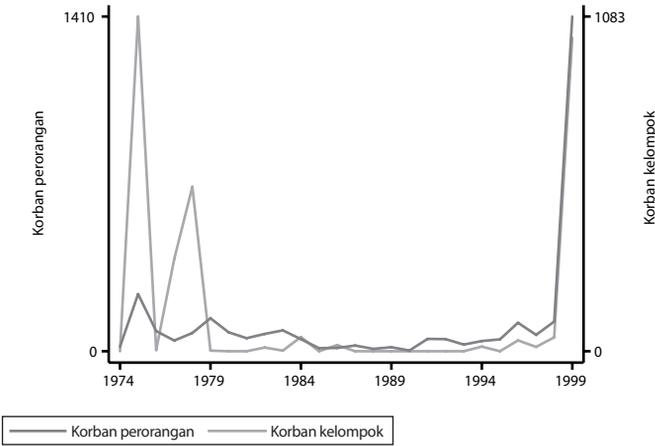
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974-1999



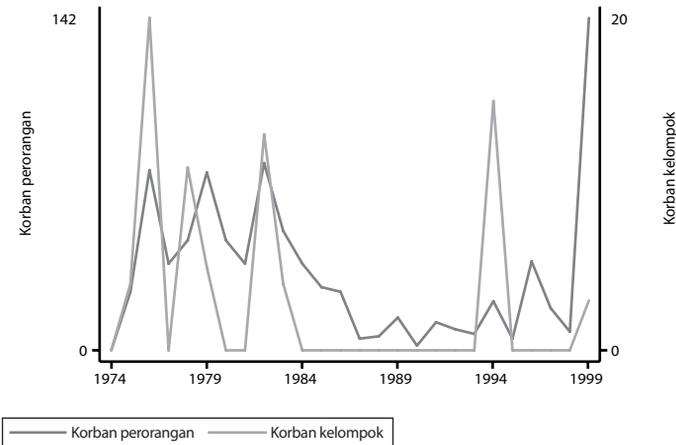
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah tindakan pengancaman yang tercatat dalam lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah tindakan kekerasan berbasis seksual yang tercatat dalam lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

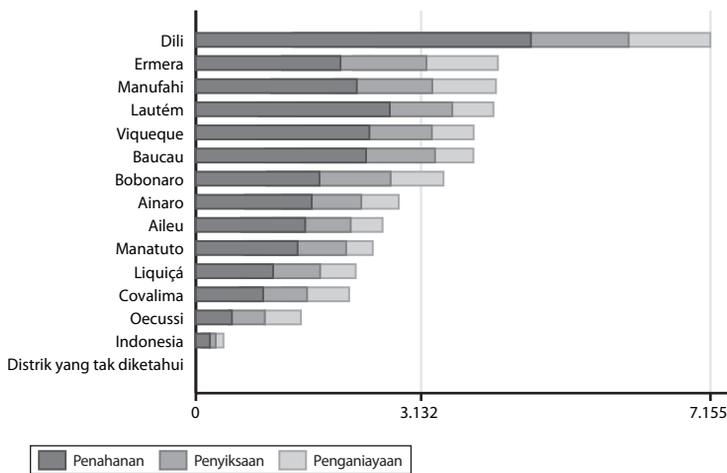
Penggunaan penahanan dan sifat pelanggaran yang dilakukan selama masa penahanan

161. Sepanjang masa pendudukan Indonesia atas Timor-Leste penahanan sewenang-wenang dan pemindahan paksa dilakukan di seluruh wilayah ini. Karena fenomena pemindahan telah dibahas secara mendalam pada paragraf-paragraf sebelum ini, bagian ini memusatkan pembahasan pada sifat dan penggunaan penahanan dalam periode mandat Komisi.

Hubungan antara penahanan dan bentuk-bentuk penganiayaan fisik

162. Secara umum tindak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan tampak berkorelasi positif. Penahanan sering terjadi dalam kejadian yang sama dengan penganiayaan fisik di seluruh wilayah. Ini tergambarkan dalam Bagan Jumlah Pelanggaran yang Tercatat, Berdasarkan Jenis dan Distrik. Jumlah keseluruhan tindak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan terjadi di Dili lebih tinggi daripada di distrik lain manapun karena pusat-pusat penahanan utama di Ataúro dan di Comarca (Penjara) Balide keduanya terletak di dalam wilayah Dili.

Bagan pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

163. Selanjutnya, penahanan dan penyiksaan yang dilaporkan sepanjang waktu sangat berkorelasi positif. Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999 juga memperlihatkan bahwa kekerasan menjadi semakin terkoordinasi dan tindak penyiksaan

* Koefisien korelasi antara penyiksaan dan penahanan yang dilaporkan per tahun antara 1974 dan 1999 adalah 0,81.

yang dilaporkan skalanya meningkat sepanjang waktu (antara akhir dasawarsa 1970 dan pertengahan dasawarsa 1980) dibandingkan dengan jumlah penahanan yang dilaporkan. Pola ini dapat mencerminkan meningkatnya kemampuan pelaku untuk mengarahkan sasaran pada korban tertentu ketika pendudukan Indonesia beranjak dari tahap awal pada akhir dasawarsa 1970 dan awal 1980 menuju tahap konsolidasi mulai 1985. Pada tahun-tahun awal invasi ada sekitar tiga kasus penahanan untuk setiap kasus penyiksaan yang dilaporkan. Setelah 1985, kedua pelanggaran tersebut tampak lebih erat terkait satu sama lain, dengan jumlah penahanan yang dilaporkan kurang lebih sama dengan tindak penyiksaan yang dilaporkan setiap tahunnya. Pola statistik yang terjadi memperlihatkan bahwa sepanjang waktu (dan khususnya setelah 1984) praktik penahanan sewenang-wenang menjadi lebih bersasaran dan semakin umum digunakan bersama dengan tindak penyiksaan.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Pola-pola pelanggaran yang dilakukan selama masa penahanan

164. Dari semua pelanggaran yang dilaporkan kepada Komisi selama proses pengambilan pernyataan naratif, penahanan adalah yang paling sering disebutkan— yakni 42.3% (25,383/60,047) dari seluruh pelanggaran nonfatal yang tercatat. Namun, penahanan sering kali dikombinasikan dengan bentuk-bentuk penganiayaan yang lain: dari jenis-jenis penganiayaan fisik utama yang dilaporkan kepada Komisi, sedikitnya 28.3% (7,174/25,383) dilakukan ketika korban berada dalam penahanan. Temuan empiris ini menunjukkan bahwa selama penahanan para korban sering kali rentan terhadap bentuk-bentuk penganiayaan fisik yang lain. Bagian ini menelusuri pola-pola dari jenis penganiayaan fisik nonfatal yang dilakukan selama masa penahanan dan yang dilakukan selama korban tidak ditahan.

165. Informasi yang dimiliki Komisi mengenai penahanan sering kali mengandung informasi lokasi dan/atau waktu yang kurang jelas. Secara khusus, 33,9% (20.334/60.047) dari pelanggaran nonfatal tidak memiliki informasi bulan dan tanggal terjadinya pelanggaran, sementara 52,9% (31.739/60.047) tidak memiliki informasi hari (tanggal) terjadinya pelanggaran. 2,3% (1.379/60.047) dari pelanggaran nonfatal tidak memiliki informasi subdistrik tempat terjadinya pelanggaran, sementara 31,2% (18.722/60.047) dari pelanggaran nonfatal tidak memiliki informasi *suco* tempat terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, analisis berikut ini mengenai penganiayaan fisik dan kaitannya dengan status korban sebagai tahanan dibatasi oleh kurangnya informasi mengenai tanggal dan lokasi dalam data yang dilaporkan.

166. Beberapa bentuk penganiayaan fisik dilaporkan lebih sering terjadi dalam penahanan daripada yang lainnya. Tabel Pelanggaran yang Tercatat dan Konteks Penahanannya, Berdasarkan Jenis Pelanggaran, 1974 – 1999 secara khusus menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilaporkan paling sering terjadi dalam masa-masa penahanan yang diketahui adalah penyiksaan (38,4%, 4.267/9.094), penganiayaan (33,2%, 27.998/9.094), dan pengancaman (21,3%, 634/9.094). Selanjutnya, penyiksaan dan penganiayaan lebih jarang dilaporkan di antara para korban yang tidak pernah mengalami penahanan: dari keseluruhan penyiksaan yang didokumentasi oleh Komisi, 16,4% (1.820/11.123) diderita oleh para korban yang tidak pernah mengalami penahanan. Dari tindak penganiayaan yang didokumentasi Komisi, 26,4% (2.227/8.436) dialami oleh korban-korban yang tidak pernah mengalami penahanan. Ini mengisyaratkan meningginya kerentanan para korban yang ada dalam penahanan terhadap penyiksaan dan penganiayaan.

167. Data statistik sendiri tidak dapat menjelaskan apakah kaitan antara penahanan dan penganiayaan fisik ini adalah bagian dari kebijakan resmi oleh para pelaku untuk menggabungkan penganiayaan fisik dengan penahanan sewenang-wenang, atau apakah korelasi ini mencerminkan perilaku oportunistis militer, polisi, dan pejabat lainnya. Akan tetapi, penelitian kualitatif dan historis Komisi cukup informatif dalam hal ini. Penelitian kualitatif Komisi telah mengidentifikasi bukti mengenai kebijakan dan praktik yang mendorong penggunaan penahanan dan cara-cara interogasi khusus (lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan).

Tabel 20: Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis pelanggaran, 1974 - 1999

| | Korban ditahan saat terjadinya pelanggaran | % korban ditahan saat terjadinya pelanggaran | Korban ditahan tapi pada tanggal yang tak diketahui | % penahanan dengan tanggal tak diketahui | Korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran | % korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran | Korban tak pernah ditahan | % yang tak pernah ditahan | Total |
|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|---------------------------|---------------------------|--------|
| Penyiksaan | 4.267 | 38,4 | 4.569 | 41,1 | 1.820 | 16,4 | 467 | 4,2 | 11.123 |
| Penganiayaan | 2.798 | 33,2 | 3.061 | 36,3 | 2.227 | 26,4 | 350 | 4,1 | 8.436 |
| | 634 | 21,3 | 723 | 24,2 | 1.442 | 48,4 | 183 | 6,1 | 2.982 |
| | 166 | 7,7 | 851 | 39,5 | 1.049 | 48,6 | 91 | 4,2 | 2.157 |
| Pelanggaran Berbasis Seksual | 109 | 12,8 | 354 | 41,5 | 367 | 43,0 | 23 | 2,7 | 853 |
| Pelanggaran Properti/ Ekonomi | 313 | 6,6 | 810 | 17,1 | 3.355 | 70,9 | 257 | 5,4 | 4.735 |
| Lain-lain | 807 | 18,6 | 1.661 | 38,3 | 1.631 | 37,6 | 240 | 5,5 | 4.339 |
| | 9.094 | 100,0 | 12.029 | 100,0 | 11.891 | 100,0 | 1.611 | 100,0 | 34.625 |

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

168. Kasus-kasus yang didokumentasikan oleh Komisi menunjukkan perubahan dalam hubungan antara pelanggaran nonfatal dan penahanan seiring dengan masuknya konflik ke fase yang terakhir. Sebagaimana yang terlihat dalam Bagan Pelanggaran yang Tercatat dan Konteks Penahanannya, Berdasarkan Tahap, 1974 – 1999, 56.7% (5592/9855) dari pelanggaran nonfatal pada 1999 dilakukan terhadap korban yang tidak berada dalam penahanan dan tidak pernah ditahan sebelumnya. Pada 1999 proporsi pelanggaran nonfatal yang dilaporkan yang dilakukan di luar

tempat-tempat penahanan adalah lebih dari dua kali lipat proporsi pada dua fase sebelumnya. Dengan demikian, tampak bahwa dalam dua fase pertama dari konflik, penggunaan penahanan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pelanggaran nonfatal yang lain.*

Tabel 21: Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan tahap, 1974 - 1999

| | Korban ditahan saat terjadinya pelanggaran | % korban ditahan saat terjadinya pelanggaran | Korban ditahan tapi pada tanggal yang tak diketahui | % penahanan dengan tanggal tak diketahui | Korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran | % korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran | Korban tak pernah ditahan | % yang tak pernah ditahan | Total |
|-----------------------|--|--|---|--|---|---|---------------------------|---------------------------|--------|
| Tahap 1 (1974 – 1983) | 2.963 | 18,8 | 8.006 | 50,8 | 4.357 | 27,6 | 446 | 2,8 | 15.772 |
| Tahap 2 (1984 – 1998) | 3.407 | 37,9 | 3.011 | 33,5 | 1.942 | 21,6 | 638 | 7,1 | 8.998 |
| Tahap 3 (1999) | 2.724 | 27,6 | 1.012 | 10,3 | 5.592 | 56,7 | 527 | 5,3 | 9.855 |
| | 9.094 | 100,0 | 12.029 | 100,0 | 11.891 | 100,0 | 1.611 | 100,0 | 34.625 |

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

169. Dari pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan selama periode penahanan yang diketahui, 16.5% (505/9094) terjadi di Dili. Dengan demikian, dibandingkan dengan distrik-distrik yang lain, proporsi yang cukup besar dari pelanggaran yang dilakukan dalam penahanan terjadi di Dili. Sementara 42.8% (695/1,623) dari pelanggaran di Liquiçá dilaporkan terjadi dalam masa-masa penahanan dan 41.5% (886/2,135) di Covalima, angka untuk Dili adalah 40.3% (1,504/3,731). Sementara itu, dari pelanggaran nonfatal yang dialami orang-orang di Oecussi dan Indonesia, masing-masing 76.0% (2,209/2897) dan 73.2% (390/533) dialami oleh korban-korban yang tidak pernah ditahan sebelumnya. Sehingga, distrik-distrik yang melaporkan proporsi penyiksaan dan penganiayaan yang relatif lebih tinggi, juga cenderung melaporkan lebih banyak pelanggaran selama penahanan.

* Sulit untuk membuat temuan yang tuntas mengenai skala relatif pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang dilakukan dalam penahanan pada Fase 1 dan 2 dari konflik, mengingat 50,8% (8.006/15.772) dari kasus penahanan selama Fase 1 dan 33,5% (3.011/8.998) dari penahanan selama Fase 2 tidak memiliki informasi tanggal yang cukup jelas untuk dapat menentukan apakah penahanan-penahanan tersebut berhubungan dengan pelanggaran lain yang dialami korban

Tabel 22: Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan distrik, 1974 - 1999

| | Korban ditahan saat terjadinya pelanggaran | % korban ditahan saat terjadinya pelanggaran | Korban ditahan tapi pada tanggal yang tak diketahui | % penahanan dengan tanggal tak diketahui | Korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran | % korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran | Korban tak pernah ditahan | % yang tak pernah ditahan | Total |
|-----------|--|--|---|--|---|---|---------------------------|---------------------------|--------|
| Lautém | 455 | 19,7 | 1.307 | 56,6 | 479 | 20,8 | 67 | 2,9 | 2.308 |
| Viqueque | 401 | 13,0 | 1.371 | 44,4 | 1.245 | 40,4 | 68 | 2,2 | 3.085 |
| Baucau | 785 | 31,8 | 891 | 36,1 | 639 | 25,9 | 155 | 6,3 | 2.470 |
| Manatuto | 271 | 16,0 | 921 | 54,5 | 465 | 27,5 | 34 | 2,0 | 1.691 |
| Manufahi | 771 | 23,8 | 1.305 | 40,3 | 924 | 28,5 | 237 | 7,3 | 3.237 |
| Aileu | 477 | 26,6 | 867 | 48,3 | 412 | 23,0 | 38 | 2,1 | 1.794 |
| Ermera | 986 | 24,8 | 1.128 | 28,4 | 1.641 | 41,3 | 216 | 5,4 | 3.971 |
| Liquiçá | 695 | 42,8 | 448 | 27,6 | 405 | 25,0 | 75 | 4,6 | 1.623 |
| Dili | 1504 | 40,3 | 1.267 | 34,0 | 646 | 17,3 | 314 | 8,4 | 3.731 |
| Ainaro | 457 | 21,6 | 1.005 | 47,5 | 582 | 27,5 | 72 | 3,4 | 2.116 |
| Covalima | 886 | 41,5 | 401 | 18,8 | 729 | 34,1 | 119 | 5,6 | 2.135 |
| Oecussi | 366 | 12,6 | 249 | 8,6 | 2.201 | 76,0 | 81 | 2,8 | 2.897 |
| Bobonaro | 992 | 32,7 | 793 | 26,1 | 1.133 | 37,3 | 116 | 3,8 | 3.034 |
| Indonesia | 48 | 9,0 | 76 | 14,3 | 390 | 73,2 | 19 | 3,6 | 533 |
| | 9.094 | 100,0 | 12.029 | 100,0 | 11.891 | 100,0 | 1.611 | 100,0 | 34.625 |

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

170. Kasus penahanan sebagian besar dialami oleh laki-laki, yakni 85,6% (21.273/25.383) dari keseluruhan kasus. Dibandingkan korban perempuan, laki-laki dua kali lebih mungkin untuk mengalami pelanggaran lainnya selama masa penahanan. Seperti yang tampak pada Tabel Pelanggaran yang Tercatat dan Konteks Penahanannya, Berdasarkan Jenis Kelamin, 1974 – 1999, dari keseluruhan korban penahanan laki-laki, setidaknya 28,1% (8.323/29.599) mengalami pelanggaran nonfatal yang lain, dibandingkan dengan 14,8% (716/4.833) dari perempuan yang mengalami pelanggaran lain selama penahanan.

Tabel 23: Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis kelamin, 1974 - 1999

| | Korban ditahan saat terjadinya pelanggaran | % korban ditahan saat terjadinya pelanggaran | Korban ditahan tapi pada tanggal yang tak diketahui | % penahanan dengan tanggal tak diketahui | Korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran | % korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran | Korban tak pernah ditahan | % yang tak pernah ditahan | Total |
|---------------|--|--|---|--|---|---|---------------------------|---------------------------|--------|
| Perempuan | 716 | 14,8 | 1.671 | 34,6 | 2.304 | 47,7 | 142 | 2,9 | 4.833 |
| Laki-laki | 8.323 | 28,1 | 10.303 | 34,8 | 9.505 | 32,1 | 1.468 | 5,0 | 29.599 |
| Tak diketahui | 55 | 28,5 | 55 | 28,5 | 82 | 42,5 | 1 | 0,5 | 193 |
| | 9.094 | 100,0 | 12.029 | 100,0 | 11.891 | 100,0 | 1.611 | 100,0 | 34.625 |

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

171. Menurut data pelanggaran nonfatal yang didokumentasi oleh Komisi, orang-orang dari kelompok umur yang berbeda mengalami tingkat penganiayaan yang berbeda selama dalam penahanan. Secara khusus, dari korban-korban yang menderita pelanggaran nonfatal yang diketahui selama masa penahanan, 55,5% (5.044/9.094) adalah orang dewasa yang muda atau berusia paruhbaya (yakni, orang-orang antara 15 sampai 49). Anak-anak dan orang-orang yang lebih tua ditahan jauh lebih jarang, dan jika ditahan, mereka mengalami tingkat penganiayaan yang jauh lebih rendah.

Tabel 24: Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan usia korban, 1974 - 1999

| | Korban ditahan saat terjadinya pelanggaran | % korban ditahan saat terjadinya pelanggaran | Korban ditahan tapi pada tanggal yang tak diketahui | % penahanan dengan tanggal tak diketahui | Korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran | % korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran | Korban tak pernah ditahan | % yang tak pernah ditahan | Total |
|-------|--|--|---|--|---|---|---------------------------|---------------------------|-------|
| 0-4 | 89 | 15,4 | 202 | 34,9 | 277 | 47,8 | 11 | 1,9 | 579 |
| 5-9 | 20 | 10,9 | 45 | 24,6 | 113 | 61,7 | 5 | 2,7 | 183 |
| 10-14 | 62 | 11,7 | 219 | 41,2 | 241 | 45,4 | 9 | 1,7 | 531 |
| 15-19 | 384 | 26,4 | 564 | 38,7 | 451 | 31,0 | 58 | 4,0 | 1.457 |
| 20-24 | 942 | 32,4 | 1.070 | 36,8 | 725 | 24,9 | 171 | 5,9 | 2.908 |
| 25-29 | 1.080 | 34,4 | 924 | 29,4 | 960 | 30,6 | 174 | 5,5 | 3.138 |
| 30-34 | 1.058 | 31,8 | 1.049 | 31,5 | 1.049 | 31,5 | 173 | 5,2 | 3.329 |

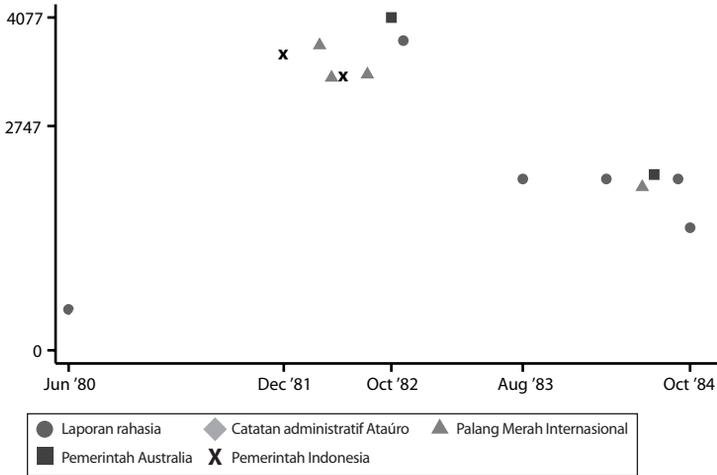
| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 35-39 | 719 | 28,2 | 789 | 30,9 | 889 | 34,8 | 154 | 6,0 | 2.551 |
| 40-44 | 564 | 26,4 | 704 | 33,0 | 755 | 35,4 | 111 | 5,2 | 2.134 |
| 45-49 | 315 | 23,0 | 512 | 37,4 | 450 | 32,9 | 91 | 6,7 | 1.368 |
| 50-54 | 235 | 19,7 | 513 | 43,1 | 402 | 33,8 | 40 | 3,4 | 1.190 |
| 55-59 | 82 | 17,4 | 176 | 37,3 | 188 | 39,8 | 26 | 5,5 | 472 |
| 60-64 | 93 | 20,9 | 188 | 42,2 | 147 | 33,0 | 17 | 3,8 | 445 |
| 65-69 | 32 | 17,7 | 78 | 43,1 | 67 | 37,0 | 4 | 2,2 | 181 |
| 70-74 | 18 | 9,7 | 95 | 51,4 | 64 | 34,6 | 8 | 4,3 | 185 |
| 75-79 | 12 | 19,7 | 23 | 37,7 | 24 | 39,3 | 2 | 3,3 | 61 |
| 80+ | 12 | 18,5 | 23 | 35,4 | 29 | 44,6 | 1 | 1,5 | 65 |
| | 3.377 | 24,4 | 4.855 | 35,1 | 5.060 | 36,5 | 556 | 4,0 | 13.848 |
| | 9.094 | 100,0 | 12.029 | 100,0 | 11.891 | 100,0 | 1.611 | 100,0 | 34.625 |

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

Pola-pola statistik yang dilaporkan tentang penahanan di Ataúro

172. Sementara penahanan sewenang-wenang digunakan sepanjang periode konflik di Timor-Leste, penahanan di Pulau Ataúro dilaporkan kebanyakan terjadi antara 1980 dan 1984. Hal ini sesuai dengan informasi yang dikumpulkan oleh Komisi secara langsung melalui proses pengambilan pernyataan dan dalam laporan-laporan sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber oleh Amnesty International. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara kedua sumber data ini. Sumber-sumber yang dikumpulkan oleh Amnesty International mengisyaratkan bahwa populasi tahanan di Ataúro meningkat dari sekitar 500 pada pertengahan 1980 menjadi kira-kira 4.000 pada September 1982 kemudian menurun menjadi sekitar 1.500 pada Oktober 1984, seperti yang tampak pada Bagan Jumlah Tahanan yang Tercatat di Ataúro, Juni 1980 – Oktober 1984.

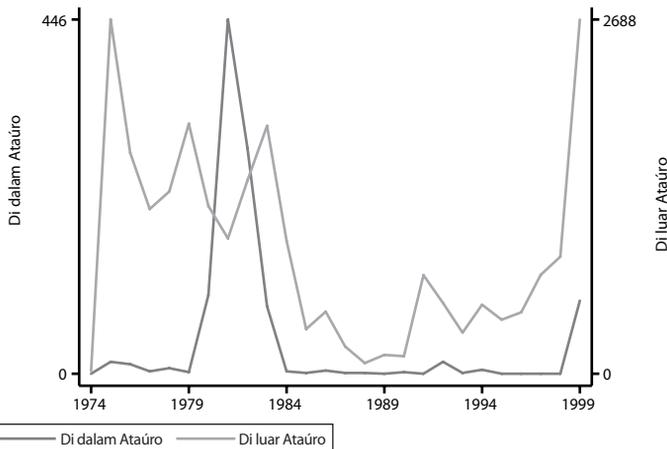
Jumlah tahanan yang tercatat di Ataúro, Juni 1980 - Oktober 1984



Referensi: Amnesty International, *East Timor: Violations of Human Rights* (1985)

173. Menurut data Komisi, penahanan yang dilaporkan di Ataúro memuncak dengan 446 tahanan pada 1982, seperti yang terlihat pada Bagan Jumlah Tahanan yang Tercatat di Ataúro, Juni 1980 – Oktober 1984. Mengingat data Amnesty International dikumpulkan dari banyak cerita saksimata, termasuk Komite Palang Merah Internasional, pejabat pemerintah Australia, dan dari catatan administrasi Indonesia, data Komisi yang dilaporkan kemungkinan berada jauh di bawah angka penahanan sebenarnya di Ataúro. Akan tetapi, baik data Amnesty International maupun data Komisi memastikan bahwa sejumlah besar orang pernah ditahan di Pulau Ataúro pada awal 1980-an.

Jumlah penahanan yang tercatat, di dalam dan di luar Ataúro, 1974-1999



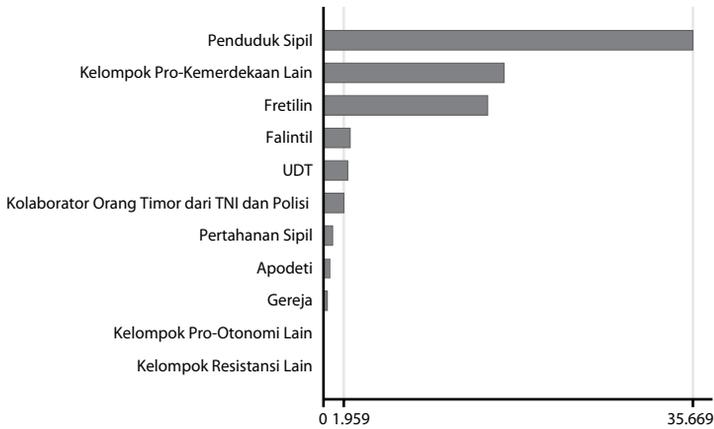
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Pola pelanggaran menurut afiliasi politik korban yang dilaporkan

174. Sejumlah hipotesis yang dibahas oleh Komisi mempertimbangkan apakah kampanye sistematis dan bersasaran didasarkan pada afiliasi politik korban. Bagian ini akan menerangkan cakupan dan pola pelanggaran yang dilaporkan terhadap penduduk sipil, petempur bersenjata Gerakan Resistansi, serta aktivis politik.

175. 88,7% (68.943/77.748) dari pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi adalah pelanggaran terhadap penduduk sipil, termasuk penduduk sipil yang tidak diketahui apakah mereka mempunyai afiliasi politik, ataupun penduduk sipil yang secara formal memang anggota dari suatu kelompok prokemerdekaan atau partai politik, seperti yang terlihat pada Bagan Pelanggaran Nonfatal yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1974 – 1999.

Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974-1999



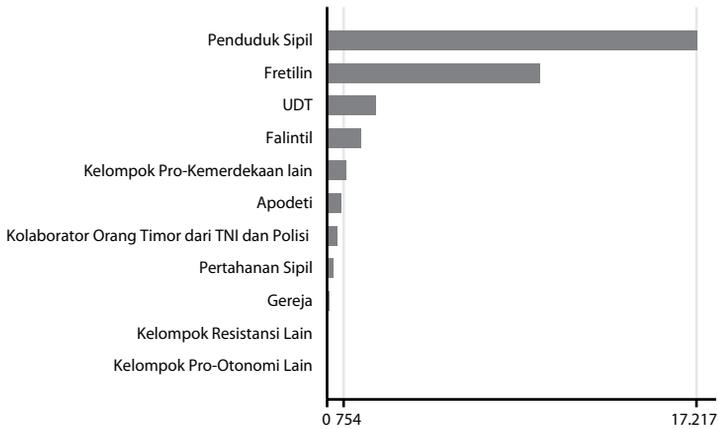
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

176. Pada waktu gerakan prokemerdekaan berkembang makin luas pada dasawarsa 1990, jumlah penduduk sipil yang berafiliasi prokemerdekaan yang mengalami pelanggaran nonfatal juga meningkat, seperti yang dapat kita lihat pada Bagan Pelanggaran Nonfatal yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1974 – 1979; Pelanggaran Nonfatal yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1980 – 1989; Pelanggaran Nonfatal yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1990 – 1998; dan Pelanggaran Nonfatal yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1999.*

* Namun, perlu dicatat bahwa hanya 87 pernyataan yang dikumpulkan di kamp pengungsian Timor Barat, dan proses sosialisasi Komisi berdasarkan distrik sering terjadi setelah bekerjasama dengan pejabat lokal. Sebagai akibatnya, orang-orang yang mempunyai afiliasi politik pro-otonomi mungkin saja kurang terwakili pada proses pengambilan pernyataan Komisi.

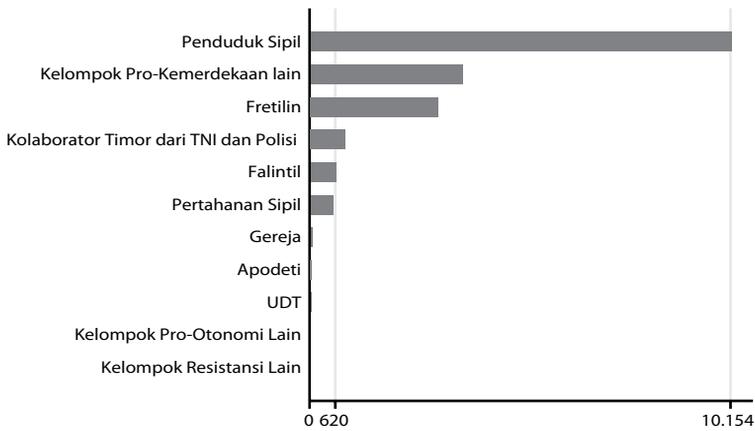
Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974-1979



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

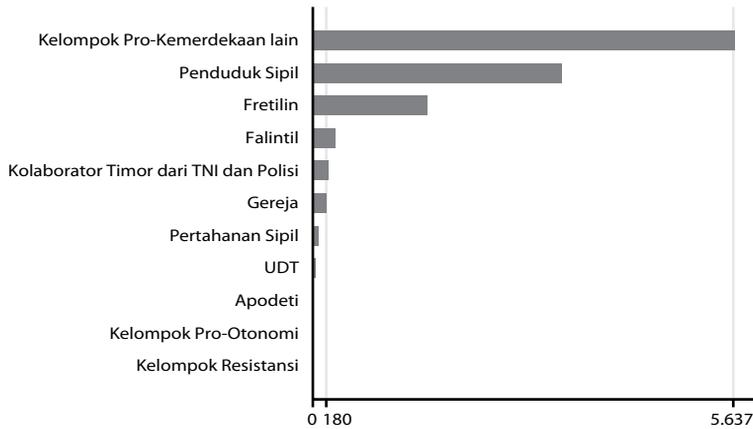
Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1980-1989



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

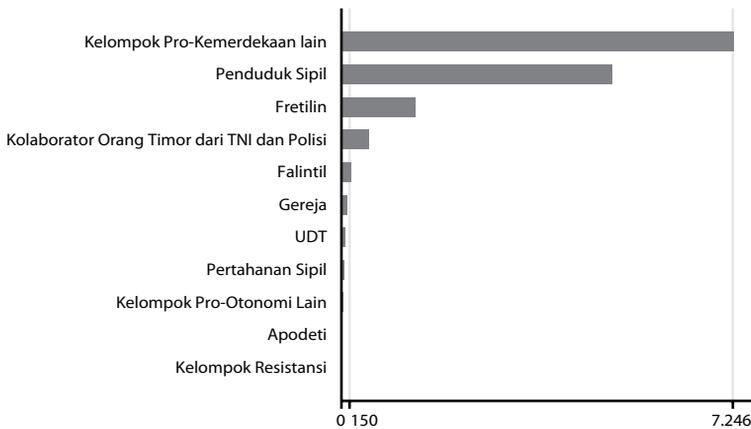
Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1990-1998



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1999

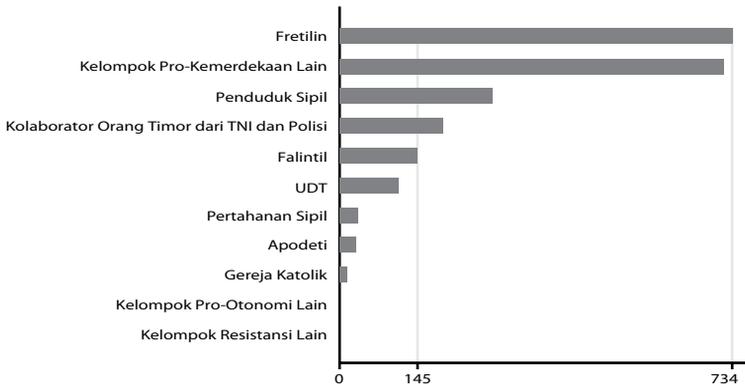


Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

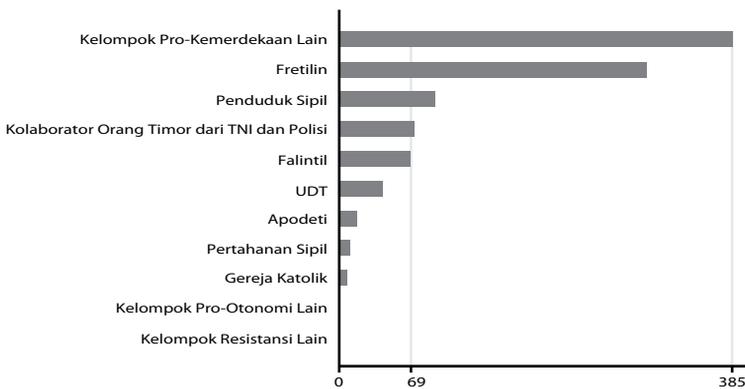
177. Untuk jenis pelanggaran nonfatal utama (penahanan, penyiksaan, penganiayaan, kerja paksa, ancaman, dan pelanggaran hak milik/ekonomi), tidak ada perbedaan penting dalam jumlah yang tercatat mengenai korban dengan afiliasi politik/sosial, seperti yang tampak pada Bagan Jumlah Penahanan yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban; Jumlah Penyiksaan yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban; Tindakan Penganiayaan yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1974 – 1999; dan Tindakan Pelanggaran Properti/Ekonomi yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1974 – 1999: penduduk yang tidak diketahui afiliasi politiknya terhitung antara 40% sampai 48% dari korban yang tercatat, sebaliknya orang-orang yang berafiliasi prokemerdekaan terhitung antara 43% sampai 55% dari pelanggaran yang tercatat. Untuk pelanggaran seksual, penduduk sipil yang tidak diketahui afiliasi politiknya berjumlah sedikit lebih tinggi (56%, 441/770, dari pelanggaran seksual) daripada penduduk sipil yang diketahui ada hubungannya dengan kelompok prokemerdekaan dan partai-partai (43,1%, 427/770).

Jumlah penahanan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban



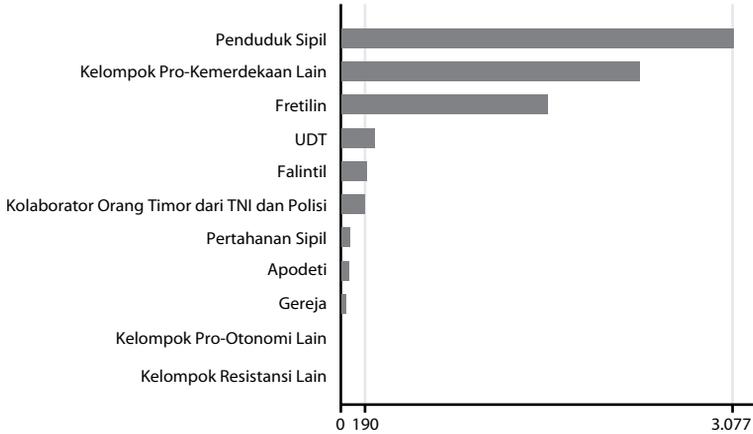
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah penyiksaan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

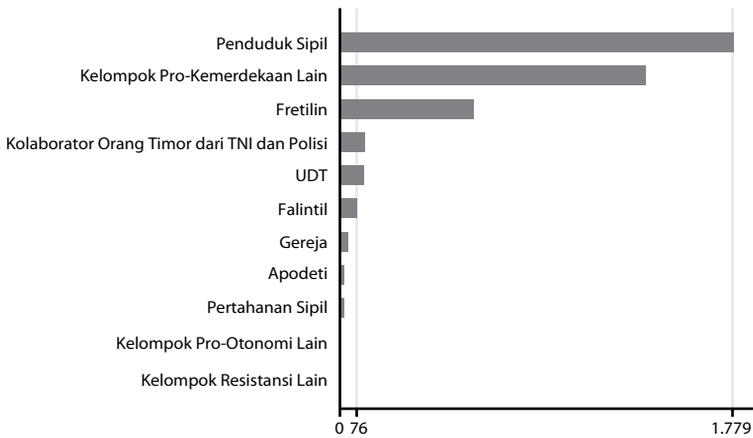
Tindak penganiayaan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

Tindakan pelanggaran properti/ekonomi yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

Studi kasus Mau Chiga: analisis kuantitatif pelanggaran yang terjadi selama operasi menumpas Resistansi

Pendahuluan

178. Bagian ini menyajikan sebuah studi kasus secara terperinci mengenai sifat dan pola pelanggaran yang dialami oleh penduduk Mau Chiga (Hatu Bulico, Ainaro) pada awal 1980-an. Kasus studi ini dibuat dalam bentuk analisis statistik deskriptif yang didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh dua orang pemimpin Desa Mau Chiga.

Latar belakang usaha pendokumentasian

179. Selama 18 tahun pemimpin-pemimpin desa Mau Chiga mencatat pemindahan, penahanan, dan pembunuhan yang terjadi karena operasi penumpasan Tentara Nasional Indonesia sehubungan dengan serangan yang dilakukan oleh Gerakan Resistansi di wilayah tersebut pada Agustus 1982. Proyek Pendokumentasian Mau Chiga dirampungkan pada Agustus 2004 ketika para pemimpin desa menyerahkan daftar tabel yang disusun dari wawancara naratif mereka kepada Komisi saat acara dengar pendapat Komisi dengan masyarakat di Mau Chiga.

180. Tujuan proyek tersebut adalah mengembangkan pendataan sejarah yang teliti atas lingkup, pola, kecenderungan, dan sifat pelanggaran yang dialami oleh anggota masyarakat Mau Chiga pada awal 1980-an. Para deponen diundang dan dianjurkan untuk berbicara mengenai pemindahan, penangkapan, atau pelanggaran fatal yang dialami oleh siapa saja yang mereka kenal yang berhubungan dengan pemberontakan pada Agustus 1982 (*levantamento*).

Keterbatasan data

181. Data yang mendasari studi kasus ini dikumpulkan melalui sampel nonacak (sampel kemudahan) dari orang-orang yang ingin melaporkan dan membagi pengalaman mereka mengenai pelanggaran hak asasi manusia (yaitu pemindahan, penahanan dan penangkapan, dan kematian yang berkaitan dengan konflik tersebut) yang ada hubungannya dengan pemberontakan Agustus 1982 dan penumpasan gerakan Resistansi. Abilio dos Santos dan Olga da Silva mengumpulkan data ini dalam dua tahapan yang terpisah. Tahap pertama pengumpulan data, dari Februari 1986 sampai dengan April 2003, Abilio dos Santos dan Olga da Silva secara berkala melakukan wawancara naratif di berbagai kampung (*aldeia*) di Desa Mau Chiga. Selama melakukan pengumpulan dan pendokumentasian data, kedua orang itu

* Abilio dos Santos adalah sekretaris Desa Mau Chiga. Olga da Silva adalah guru sekolah dasar di Mau Chiga. Komisi memilih untuk mengikuti ejaan resmi RDTL 'Mau Chiga', meskipun banyak orang juga mengenali desa ini sebagai 'Mauxiga'.

mengunjungi *aldeia-aldeia* berikut: Mau Chiga, Hatuquero, Goulora, Leotelo-1, dan Leotelo-2. Deponen-deponen diseleksi berdasarkan jaringan sosial para pewawancara dan referensi orang yang diwawancarai. Tahap kedua pengumpulan data, dari Mei 2003 sampai Juli 2004, terdiri atas penyusunan daftar korban penahanan, pemindahan, dan kematian yang berkaitan dengan konflik. Selama tahap kedua ini, sejumlah responden yang pernah memberikan keterangan pada tahap pertama pengumpulan data, diwawancarai kembali untuk memperjelas secara lebih mendalam aspek yang kurang jelas dalam keterangan naratif yang sudah ada.

182. Proyek ini membatasi keterangan yang dikumpulkan pada beberapa pelanggaran spesifik, yaitu penahanan sewenang-wenang, pemindahan, dan kematian yang berkaitan dengan konflik yang secara langsung dapat dihubungkan pada peristiwa 20 Agustus 1982 dan penumpasan yang terjadi berikutnya. Oleh sebab itu proyek ini tidak mendokumentasikan pelanggaran dalam bentuk lain, seperti misalnya penghancuran milik pribadi dan kejahatan seksual. Yang juga tidak didokumentasikan adalah pelanggaran yang terkait dengan peristiwa lain yang tidak berhubungan dengan pemberontakan 20 Agustus.

183. Proyek ini memberikan perhatian khusus untuk menghindari masalah terjadinya laporan ganda tentang korban yang sama yang disampaikan deponen pada tahap berbeda dalam proses dokumentasi. Pertama, kelompok pengumpul data secara berkala memeriksa seluruh daftar untuk menghindari adanya laporan ganda tentang korban. Kedua, sesudah memasukkan data ke dalam *database* elektronik, kelompok proyek tersebut melakukan tes analitis dan pemeriksaan lewat komputer dalam upaya menentukan nama mana yang ada mungkin merupakan laporan ganda tentang korban yang sama.*

Latar belakang historis

184. Pada 6 Juli 1982 anggota-anggota Falintil dan gerakan klandestin setempat mulai merencanakan suatu rangkaian penyerangan pada pos militer Indonesia di sekitar Mau Chiga. Seorang informan membocorkan rencana tersebut kepada tentara Indonesia. Pada 10 Juli tentara Indonesia dan Hansip dari Hatu Builico mulai melaksanakan penggeledahan dari rumah ke rumah di Goulora, Mau Chiga, dan Hatuquero. Mereka menahan lebih dari 30 orang, termasuk 13 orang yang menghadiri pertemuan 6 Juli. Yang ditahan langsung dibawa ke markas besar wilayah (Kodim) di Kota Ainaro. Pada hari-hari berikutnya, tentara Indonesia menahan lebih banyak orang. Mereka membawa tahanan tersebut ke markas subdistrik (Koramil) di Hatu Builico.

185. Meskipun sebagian orang telah ditangkap, pada 20 Agustus 1982, sekitar pukul 04.30, Falintil bersama beberapa orang dari Dare dan Mau Chiga menyerbu beberapa pos ABRI di sekitar Mau Chiga, termasuk Koramil di Dare. Pada hari yang sama, tentara ABRI dan Hansip dari pos yang diserang dan juga pos lain di wilayah tersebut mengadakan serangan balasan. Pada hari-hari berikutnya tambahan pasukan ABRI

* Proses pemeriksaan ini menemukan tujuh laporan ganda mengenai pelanggaran fatal.

dari luar wilayah tersebut, termasuk satuan-satuan dari Batalion 745 dan 744, disebar di sekitar Mau Chiga. Antara 20 Agustus dan 24 Agustus pasukan tentara Indonesia dan Hansip menghancurkan dan menjarah milik pribadi masyarakat. Sejumlah besar penduduk Desa Mau Chiga dipaksa pindah atau melarikan diri ke luar desa karena takut akan keselamatan pribadi mereka. Tentara militer Indonesia memindahkan penduduk dengan paksa ke beberapa lokasi, termasuk Pulau Atauro (Dili), Dotik (Alas, Manufahi), dan Dare (Hatu Builico, Ainaro).

Analisis statistik deskriptif pelanggaran yang dilaporkan pada Proyek Dokumentasi Mau Chiga

Laporan pemindahan dan penangkapan yang diderita penduduk Mau Chiga

Profil demografis para korban pemindahan dan penangkapan

186. Proyek ini mendokumentasikan 1.803 tindak pemindahan yang terjadi pada penduduk Mau Chiga antara Juli 1982 dan Januari 1986. 1.803 pemindahan ini dialami oleh 464 orang penduduk Mau Chiga: 48,7% (226/464) dari mereka adalah wanita dan 38,8% (180/464) adalah anak-anak.*

187. Ke-464 korban pemindahan dan penangkapan sama dengan kira-kira 20,4% (464/2.269) dari jumlah total penduduk Desa Mau Chiga.† Jadi, hasil temuan proyek ini sesuai dengan hipotesis bahwa pemindahan di Mau Chiga pada 1980-an dilakukan secara meluas.

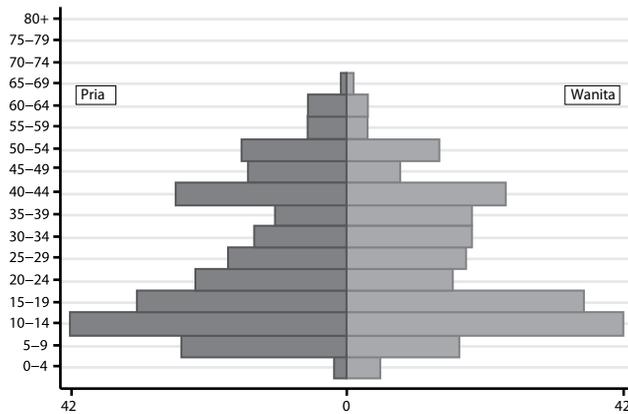
188. Dari korban pemindahan yang dilaporkan, 80,0% (371/464) di antaranya pada awalnya ditahan dan dipindahkan bersama keluarga mereka. Sisanya, yang 20% (93/464), pada awalnya ditahan sendiri (tidak bersama keluarganya).‡ Seperti yang tampak pada Bagan <gMauChigaASD1100.pdf>, 41,2% (191/464) pemindahan dialami oleh penduduk yang berusia antara 10 dan 24. Seperti yang dulu dan kini masih tetap terjadi pada kasus di sebagian besar Timor-Leste, penduduk Mau Chiga kebanyakan terdiri atas orang yang berusia di bawah 25 tahun. Oleh sebab itu, hasil temuan Proyek Dokumentasi Mau Chiga sesuai dengan hipotesis bahwa tentara militer Indonesia secara aktif berusaha memusnahkan dasar sosial dan operasional gerakan Resistansi di Mau Chiga dengan cara pemindahan paksa masyarakat umum (termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua).

* Komisi menggunakan standar yang diakui internasional yang mendefinisikan anak-anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun (lihat Artikel 1 dari Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (UN Doc A/44/49 (1989)), yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/25 20 November 1989 (resmi diberlakukan pada 2 September 1990).

† Jumlah penduduk Mau Chiga berdasarkan Survei *Suco* Timor-Leste 2001.

‡ Orang yang dipindahkan secara individu (perorangan) dipindahkan dengan cara ini. Mereka ditangkap oleh tentara militer Indonesia ketika mereka sedang sendirian, biasanya orang itu sedang mengerjakan ladang taninya, atau di tempat lain yang jauh dari tempat tinggalnya.

Jumlah korban pemindahan yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: 0,4% data tidak merekam usia dan jenis kelamin korban

Pertanggungjawaban pemindahan dan tindak penangkapan dalam skala besar terhadap penduduk Mau Chiga

189. Keseluruhan tindakan pemindahan dari 1.803 orang yang dilaporkan ini, yang didokumentasikan oleh Proyek Dokumentasi Mau Chiga, disangkutpautkan dengan militer Indonesia. Dalam beberapa kasus khusus, deponen melaporkan keterlibatan satuan tertentu dari tentara militer Indonesia atau kekuatan pertahanan sipil. Hansip Hatu Builico dilaporkan telah menjalankan 31,7% (571/1.803) dari tindak pemindahan yang menyangkut penduduk Mau Chiga. Pada peristiwa pemindahan yang sama, dilaporkan pada Proyek Dokumentasi Mau Chiga bahwa Hansip Hatu Builico bekerjasama dan bertindak dengan pengarahannya dari Komando Resort Militer (Korem) Dili, Komando Distrik Militer (Kodim) Ainaro dan Komando Rayon Militer (Koramil) Hatu Builico. Keseluruhan tindakan ini terjadi baik 7 Juli 1982, 29 Agustus 1982, maupun 30 Agustus 1982.

Pola tindak pemindahan dan penangkapan lintas waktu

190. Tindak pemindahan yang dilaporkan dipusatkan dalam dua periode utama, yaitu: kuartal ketiga 1982 ketika 51,0% (919/1.803) pemindahan itu dilaporkan, dan kuartal keempat 1985 ketika 40,6% (732/1.803) pemindahan itu dilaporkan. Pada kedua masa inilah sebagian besar penduduk Mau Chiga yang diasingkan ke Atauro dipindahkan dari Mau Chiga ke Atauro dan dikembalikan lagi ke Mau Chiga dari Atauro. Pada kedua periode ini, orang-orang pertama dipindahkan sementara ke lokasi transit untuk waktu singkat antara satu hari sampai dengan beberapa minggu.

Pola tindak pemindahan dan penangkapan lintas ruang geografis dan lamanya penahanan

191. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini, masa lamanya penahanan yang dilaporkan pada proyek dokumentasi sangat bervariasi, antara satu hari sampai dengan 1.005 hari. Sekitar 41,0% (739/1.803) dari keseluruhan yang dilaporkan berlangsung selama sepuluh hari atau kurang, 22,1% (399/1.803) dari peristiwa pemindahan berlangsung antara 101 dan 300 hari, dan 20% (368/1.803) antara 701 dan 900 hari. Data yang dikumpulkan oleh Proyek Dokumentasi Mau Chiga sesuai dengan hipotesis bahwa meskipun penduduk Mau Chiga dipindah-pindahkan beberapa kali (setiap orang rata-rata dipindahkan 3,9 kali), sekitar separuh dari pemindahan ini berlangsung dalam waktu yang singkat (dalam waktu kurang dari seminggu), sedangkan separuhnya lagi pada dasarnya lebih lama (bervariasi antara tiga sampai dengan 33 bulan).

| Lama | Jumlah | % (Persentasi) |
|-----------------|--------|----------------|
| 1 hari | 192 | 10,7 |
| 2-10 hari | 547 | 30,3 |
| 11-100 hari | 113 | 6,3 |
| 101 – 300 hari | 399 | 22,1 |
| 301-500 hari | 87 | 4,8 |
| 501-700 hari | 8 | 0,4 |
| 701-900 hari | 368 | 20,4 |
| 901-1005 hari | 87 | 4,8 |
| Tidak diketahui | 2 | 0.1 |
| Total | 1.803 | 100,0 |

Sumber: Data yang dikumpulkan oleh sekretaris Desa Mau Chiga.

192. Tentara Indonesia menahan penduduk Mau Chiga dalam jangka panjang di beberapa lokasi, termasuk Pulau Ataúro, Dotik, Kota Ainaro, dan Dare. 79,3% (368/464) penduduk Mau Chiga yang didokumentasikan oleh Proyek Dokumentasi Mau Chiga telah ditahan dalam jangka panjang di Ataúro.* Kelompok-kelompok lebih kecil penduduk Mau Chiga dilaporkan ditahan dalam jangka panjang di Dotik

* Tentara Indonesia mengirim 360 dari 368 penduduk Mauchiga ini ke Ataúro pada 30 Agustus 1982. Delapan orang sisanya dikirim ke Ataúro pada 5 September 1982 setelah diinterogasi selama satu minggu di Lesuhati.

dan Kota Ainaro: 80 orang ditahan selama dua tahun dan enam bulan di Dotik mulai November 1982, dan tujuh orang ditahan selama dua tahun dan sembilan bulan di Kota Ainaro mulai April 1983. Wawancara lanjutan yang diadakan oleh Komisi dengan penduduk Mau Chiga pada 2005 di Mau Chiga menunjukkan bahwa orang-orang yang ditahan dalam jangka panjang di Dotik dan Ainaro ditahan di sana karena Ataúro sudah terlalu penuh.*

193. Pola umum yang dilaporkan tentang pemindahan ke dan dari lokasi penahanan jangka panjang bagi penduduk Mau Chiga adalah sebagai berikut: korban biasanya ditangkap dan ditawan di Mau Chiga dan kemudian dibawa ke berbagai lokasi yang tidak jauh letaknya, tempat mereka biasanya ditahan selama satu sampai dengan sepuluh hari. Karena lokasi ini biasanya merupakan lokasi transit sementara menuju ke pusat penahanan jangka panjang atau kembali ke Mau Chiga, periode penahanan mereka biasanya merupakan rangkaian penahanan singkat. Tempat-tempat orang ditawan untuk periode pendek ini adalah Kota Ainaro, Bonuk (Hatu Udo, Ainaro), Dare (Hatu Bulico, Ainaro), Lesuhati (Hatu Bulico, Ainaro), Same (Manufahi), dan penjara Comarca di Dili. Yang lainnya ditawan di lokasi lain seperti Dotik, Kota Ainaro, dan Dare, sebelum atau sesudah periode penahanan jangka panjang mereka. Penduduk Mau Chiga juga ditawan untuk beberapa bulan di Dare, Dotik, Same, Kota Ainaro, dan Bonuk dalam perjalanan menuju atau dari lokasi-lokasi penahanan jangka panjang mereka.

Tabel 26: Tabulasi silang lamanya periode tindak pemindahan penduduk Mau Chiga menurut lokasinya, 1982 – 1985

| | 1 hari | 2 – 10 hari | 11-100 hari | 101-300 hari | 301-500 hari | 501-700 hari | 701-900 hari | 901-1005 hari | Tidak diketahui | Total |
|----------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-------|
| Ainaro | 2 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 |
| Ataúro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 368 | 0 | 1 | 377 |
| Bonuk | 0 | 355 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| Comarca | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Dare | 172 | 0 | 0 | 377 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630 |
| Dotik | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | 0 | 93 |
| Lesuhati | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| Same | 4 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Total | 192 | 547 | 113 | 399 | 87 | 8 | 368 | 87 | 2 | 1.803 |

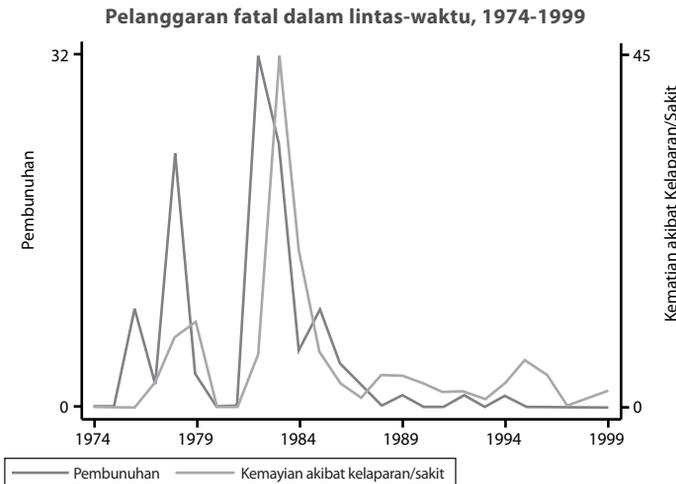
* Wawancara CAVR dengan Olga da Silva, Abilio dos Santos, Xavier do Amaral dan António Pires, di Mauchiga, 16 April 2005.

194. Data yang dikumpulkan Proyek Dokumentasi Mau Chiga sesuai dengan hipotesis bahwa di Atauro dan di Dotik dan Kota Ainaro tentara Indonesia menggunakan penahanan jangka panjang terhadap para pendukung dan yang dicurigai mendukung gerakan Resistansi, sebagai suatu strategi untuk melumpuhkan dasar sosial dan dukungan operasional gerakan Resistansi di Mau Chiga. Data ini juga memperlihatkan bahwa Penduduk Mau Chiga mengalami serangkaian pemindahan dan penahanan sebelum dan sesudah masa penahanan jangka panjang mereka di Atauro atau di Dotik dan di Kota Ainaro.

Pelanggaran fatal yang diderita Penduduk Mau Chiga

Distribusi pelanggaran fatal lintas waktu dan penyebab kematian yang dilaporkan yang dialami penduduk Mau Chiga

195. Proyek Dokumentasi Mau Chiga mendokumentasikan 262 kematian penduduk Mau Chiga yang berkaitan dengan konflik selama periode acuan Komisi: 44,7% (117/262) dari jumlah ini dibunuh, dan sisanya 55,3% (145/262) mati karena sakit atau kelaparan. Bagan Pelanggaran Fatal dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999, menunjukkan bahwa 68,3% (179/262) dari pelanggaran fatal ini terjadi pada periode awal invasi dan pendudukan tentara Indonesia antara 1978 dan 1984. Selanjutnya, pola-pola pembunuhan dan kematian yang berhubungan dengan penyakit/kelaparan penduduk Mau Chiga berkorelasi secara positif.⁷ Jadi data yang dikumpulkan Proyek Dokumentasi Mau Chiga sesuai dengan hipotesis bahwa pembunuhan dan kematian karena penyakit/kelaparan di Mau Chiga yang berkaitan dengan konflik sebagian besar terjadi pada waktu adanya operasi balasan terhadap gerakan Resistansi oleh tentara militer Indonesia.



* Koefisien korelasi antara kedua rangkaian ini adalah 0,57.

196. Meskipun pola pembunuhan dan kematian karena penyakit/kelaparan berkorelasi lintas waktu, ada beberapa perbedaan menonjol antara kedua kejadian itu. Pembunuhan yang terdokumentasi terpusat sebagian besar pada 1978 dan 1982 – 1983 (dengan 19,7% [23/117] yang terjadi pada 1978 dan 47,9% [56/117] pada 1982 – 1983), sedangkan 44,8% (65/145) kematian karena penyakit/kelaparan terpusat pada 1983 – 1984 ketika penduduk Mau Chiga mengalami deportasi massal dari kediaman mereka.

Pola pertanggungjawaban yang diterakan untuk pelanggaran fatal yang dilaporkan terjadi pada Penduduk Mau Chiga

197. Dari seluruh pembunuhan yang didokumentasikan oleh Proyek Dokumentasi Mau Chiga, 83,8% (98/117) dilaporkan merupakan tanggung jawab sepenuhnya tentara Indonesia, 6,0% (7/117) merupakan tanggung jawab sepenuhnya pasukan pembantu mereka asal Timor-Leste, dan 10,3% (12/117) tidak dilaporkan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Tidak ada laporan mengenai pembunuhan yang dilakukan bersama antara tentara Indonesia dan pasukan pembantu asal Timor-Leste, juga tidak ada laporan mengenai adanya pembunuhan yang dilakukan oleh perorangan yang terkait dengan gerakan Resistansi. Pola pertanggungjawaban terkait ini rupanya membedakan Mau Chiga dari bagian lain di Timor-Leste, di mana sejumlah besar pembunuhan merupakan tindakan bersama antara pasukan tentara Indonesia dengan pasukan pembantu mereka asal Timor-Leste (lihat di atas).

198. Dari pembunuhan-pembunuhan yang terdokumentasi terhadap penduduk Mau Chiga yang dikaitkan dengan tentara Indonesia, 66,3% (65/98) diderita oleh orang yang ada hubungannya dengan gerakan Resistansi, dan sisanya yang 33,7% (33/98) diderita oleh penduduk sipil.

Pola pelanggaran fatal terhadap penduduk Mau Chiga menurut afiliasi politik korban

199. Penyebaran pembunuhan dan kematian karena penyakit/kelaparan yang terdokumentasi sangat bervariasi menurut afiliasi politik para korban. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, 64,1% (75/117) pembunuhan dilaporkan merupakan pembunuhan terhadap orang yang secara formal berkaitan dengan gerakan Resistansi. Sebaliknya, seluruh orang (kecuali satu) yang mati karena penyakit atau kelaparan adalah penduduk sipil tak bersenjata. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa meskipun pembunuhan terutama disasarkan pada anggota gerakan Resistansi dan anggota klandestin, tentara Indonesia dan pembantu-pembantu mereka membunuh sejumlah besar penduduk sipil selama berlangsungnya operasi penumpasan gerakan Resistansi.

| Tabel 27: Tabel penyebaran pelanggaran fatal yang dilaporkan menurut afiliasi politik korban, 1974 - 1999 | | | | |
|---|------------|-------|---------------------------------|-------|
| Afiliasi korban | Pembunuhan | | Kematian karena sakit/kelaparan | |
| | Jumlah | % | Jumlah | % |
| Penduduk sipil tak bersenjata | 42 | 35,9 | 144 | 99,3 |
| Anggota Gerakan Resistansi/ Klandestin | 75 | 64,1 | 1 | 0,7 |
| Total | 117 | 100,0 | 145 | 100,0 |

Sumber: Data yang dikumpulkan oleh sekretaris Desa Mau Chiga.

200. Penyebaran geografis pembunuhan penduduk Mau Chiga yang dilaporkan berbeda dengan penyebaran geografis kematian karena kelaparan dan penyakit. Seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini, kematian yang berhubungan dengan penyakit/kelaparan hampir selalu terjadi di kecamatan-kecamatan Kota Ainaro (Ainaro), Alas (Manufahi), dan Ataúro (Dili), sebaliknya, pembunuhan yang dilaporkan sebagian besar terjadi di Kota Ainaro (Ainaro), Alas (Manufahi), dan Same (Manufahi).

| Tabel 28: Penyebaran pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilaporkan menurut afiliasi politik dan lokasi geografis, 1974 - 1999 | | | | | | |
|---|------------|------|-------------------------------------|------|--------|------|
| Kecamatan di mana pelanggaran terjadi | Pembunuhan | | Kematian karena sakit/ kelaparan | | Total | |
| | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| Ainaro, Ainaro | 45 | 38,5 | 43 | 29,7 | 88 | 33,6 |
| Maubisse, Ainaro | 4 | 3,4 | 0 | 0 | 4 | 1,5 |
| Bobonaro, Bobonaro | 1 | 0,9 | 0 | 0 | 1 | 0,4 |
| Alas, Manufahi | 31 | 26,5 | 47 | 32,4 | 78 | 29,8 |
| Fatuberliu, Manufahi | 4 | 3,4 | 0 | 0 | 4 | 1,5 |
| Same, Manufahi | 31 | 26,5 | 0 | 0 | 31 | 11,8 |
| Laleia, Manatuto | 1 | 0,9 | 0 | 0 | 1 | 0,4 |
| Ataúro, Dili | 0 | 0 | 55 | 37,9 | 55 | 21,0 |
| Total | 117 | 100 | 145 | 100 | 262 | 100 |

Sumber: Data yang dikumpulkan oleh sekretaris Desa Mau Chiga.

Pola pelanggaran-pelanggaran fatal terhadap penduduk Mau Chiga yang dilaporkan menurut usia dan jenis kelamin korban

201. Seperti kasus pembunuhan lainnya di seluruh Timor-Leste, sebagian besar korban pembunuhan di Mau Chiga yang dilaporkan kepada Proyek Dokumentasi Mau Chiga adalah laki-laki (92,3% [108/117] pembunuhan yang dilaporkan adalah terhadap laki-laki dan sisanya yang 7,7% [9/117] adalah perempuan). Kalau kita beralih dari hitungan pelanggaran sederhana ke hitungan pelanggaran berbasis penduduk, terlihat bahwa, secara rata-rata, relatif terhadap persentase penduduk Mau Chiga, angka berbasis penduduk menunjukkan laki-laki yang terbunuh sepuluh kali lebih tinggi. Sembilan puluh lima laki-laki per 1.000 dilaporkan terbunuh selama periode acuan Komisi, dibandingkan dengan delapan perempuan per 1.000.*

202. 41,0% (48/117) pembunuhan yang terdokumentasi adalah pembunuhan terhadap laki-laki muda berusia antara 15 dan 29. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa sebagai bagian dari strategi operasi balasan terhadap Gerakan Resistansi, tentara Indonesia mengarah pada laki-laki muda dalam usia dinas militer.

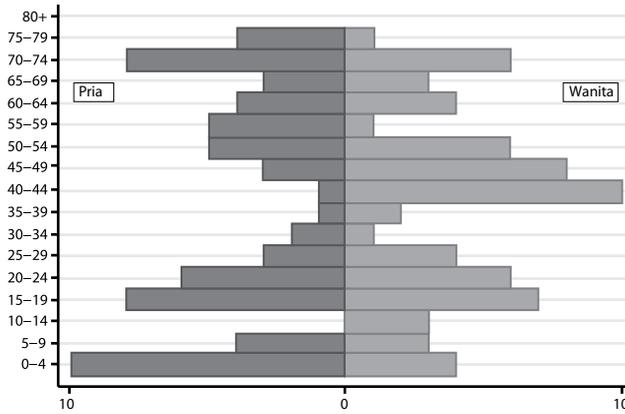
203. Sebaliknya penyebaran menurut jenis kelamin pada kematian karena penyakit dan kelaparan terlihat lebih merata: 50,3% (73/117) adalah kematian laki-laki dan 49,7% (72/117) adalah kematian perempuan. Dipandang dari segi persentase penduduk, angka berbasis penduduk yang sepadan tentang kematian karena sakit/kelaparan diselidiki untuk laki-laki dan perempuan: 64 per 1.000 lelaki di Mau Chiga dilaporkan mati karena kelaparan/sakit, hal yang sama juga terjadi pada kasus untuk perempuan.†

204. Seperti yang terlihat pada bagan di bawah ini, penduduk Mau Chiga yang paling sering dilaporkan mati karena sakit dan kelaparan adalah anak-anak dan orang berusia lanjut. Pola kerentanan mati karena kelaparan pada anak-anak muda usia dan orang yang lanjut usia adalah sama dengan yang tercatat oleh Komisi di seluruh Timor-Leste.

* Angka berbasis penduduk ini diambil dari jumlah penduduk berdasarkan Survei Suco Timor-Leste 2001.

† Angka berbasis penduduk ini juga diambil dari jumlah penduduk berdasarkan Suco Survey Timor-Leste 2001.

Jumlah kematian akibat kelaparan/sakit yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999



Sumber: Data yang dikumpulkan oleh Sekretaris Desa Mau Chiga
 Catatan: 1,4% data tidak merekam usia dan jenis kelamin korban

Ringkasan dan kesimpulan

205. Komisi mengumpulkan dan menggunakan serangkaian luas sumber-sumber data empiris. Komisi mengumpulkan hampir 8.000 pernyataan naratif dari orang-orang Timor-Leste berkenaan dengan pengalaman mereka selama 25 tahun berada dalam situasi konflik, melakukan survei rumah tangga yang menyelidiki tentang kematian dan pemindahan dari hampir sebanyak 1.400 rumah tangga, melakukan sensus perkuburan umum di seluruh 13 distrik Timor-Leste, dan mengembangkan *dataset* dari informasi yang dikumpulkan dari organisasi dan kelompok lain.* Tujuan bab mengenai statistik ini ada tiga:

- Menyajikan berbagai perkiraan yang beragam, independen, dan ilmiah mengenai keseluruhan cakupan, pola, dan kecenderungan dari kematian dan pemindahan yang terjadi selama periode acuan Komisi
- Menggambarkan secara garis besar serta menafsirkan statistik deskriptif berkenaan dengan sifat dan cakupan pelanggaran, tingkah laku para pelaku tindak kekerasan, dan penggambaran mengenai sifat korban, yang dikumpulkan dari berbagai sumber data independen, dan
- Mendokumentasikan metode-metode statistik yang digunakan untuk memperoleh temuan-temuan statistik Komisi.

* Informasi dari luar yang disusun ke dalam dataset termasuk laporan-laporan dan bahan-bahan materi lainnya dari Amnesty International, wawancara naratif dikumpulkan oleh Fokupers (organisasi wanita Timor Timur yang memperjuangkan hak-hak) dan daftar-daftar tabel yang dibuat oleh para pemimpin desa Mauchiga.

206. Untuk mencapai kedalaman dan keluasan analisis ini, Komisi dan Benetech Human Rights Data Analysis Group bekerjasama mengembangkan berbagai proyek data yang meliputi pengumpulan data dalam skala luas, kodifikasi data, penyajian *database*, *record linkage*, dan analisis statistik. Hasil analisis statistik menolong untuk membuka dan menjelaskan pengetahuan sosial dan historis dari kekerasan politik di Timor-Leste antara 1974 dan 1999. Meskipun demikian, sebagai satu bagian dari keseluruhan temuan-temuannya, temuan-temuan statistik Komisi harus digabungkan dan diintegrasikan dengan temuan-temuan kualitatif, historis, dan yuridis.

Catatan akhir

1. John Waddingham, "Timor-Leste Death Toll, 1975 – 1999," submisi kepada CAVR, 22 Juli 2003.
2. Terence Hull "From Province to Nation: The Demographic Revolution of a People" dalam James J. Fox dan Dionisio Babo Soares (ed), *Out of the Ashes: The Destruction and Reconstruction of East Timor*, (Crawford House Publishing. Bathurst, Australia: 2000), hal. 38.
3. Arnold Kohen dan John Taylor, *An Act of Genocide: Indonesia's Invasion of East Timor*, Tapol, London, 1979, hal. 58.
4. John G Taylor, "Encirclement dan Annihilation': The Indonesian Occupation of East Timor," dalam Robert Gelletely dan Ben Kiernan (eds) *The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
5. Report on Timor-Leste," dokumen Gereja Timor-Leste, 12 Juli 1979, dikutip dalam C. Gilbert dan J. Waddingham, "Timor-Leste – How many people are missing?," laporan dari Timor Information Service kepada sebuah komite di Senat Australia (Australian Senate Standing committee on Foreign Affairs dan Defence), 28 Maret 1982.
6. Artikel 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak, Dokumen Sidang Umum PBB A/44/49 (1989).
7. Biro Pusat Statistik, Sensus Penduduk Indonesia, 1990, Jakarta, 1994.

Chega! merupakan sebuah kesaksian yang meresahkan. Laporan ini akan menentang para pembaca Indonesia yang mengira bahwa di bawah rezim Soeharto semuanya berjalan damai di provinsi Indonesia ke-27 saat itu. Halaman demi halaman kita dapat membaca cerita-cerita korban pembantaian, perkosaan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan berbagai kejahatan yang tidak terbayangkan. ...[M]asyarakat di Indonesia dapat belajar dari ***Chega!*** Berkat penerbitan laporan ini oleh KPG, pembelajaran tersebut menjadi dimungkinkan. Laporan ini adalah suatu kontribusi penting ke arah demokratisasi di Indonesia dan reformasi sektor keamanannya..

Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM

Laporan CAVR adalah ensiklopedi sejarah kita, yang kaya baik dalam hal ajaran juga penderitaan. Kita harus memanfaatkan ajarannya yang luar biasa untuk... mencegah krisis di masa depan.

Jose Ramos-Horta,
Penerima Anugrah Nobel Perdamaian, Presiden Timor-Leste

Sosialisasi ***Chega!*** penting sekali bagi rakyat Timor-Leste maupun Indonesia agar rakyat kedua belah pihak tahu apa yang sesungguhnya terjadi.

Ade Rostina Sitompul,
pejuang Hak Asasi Manusia

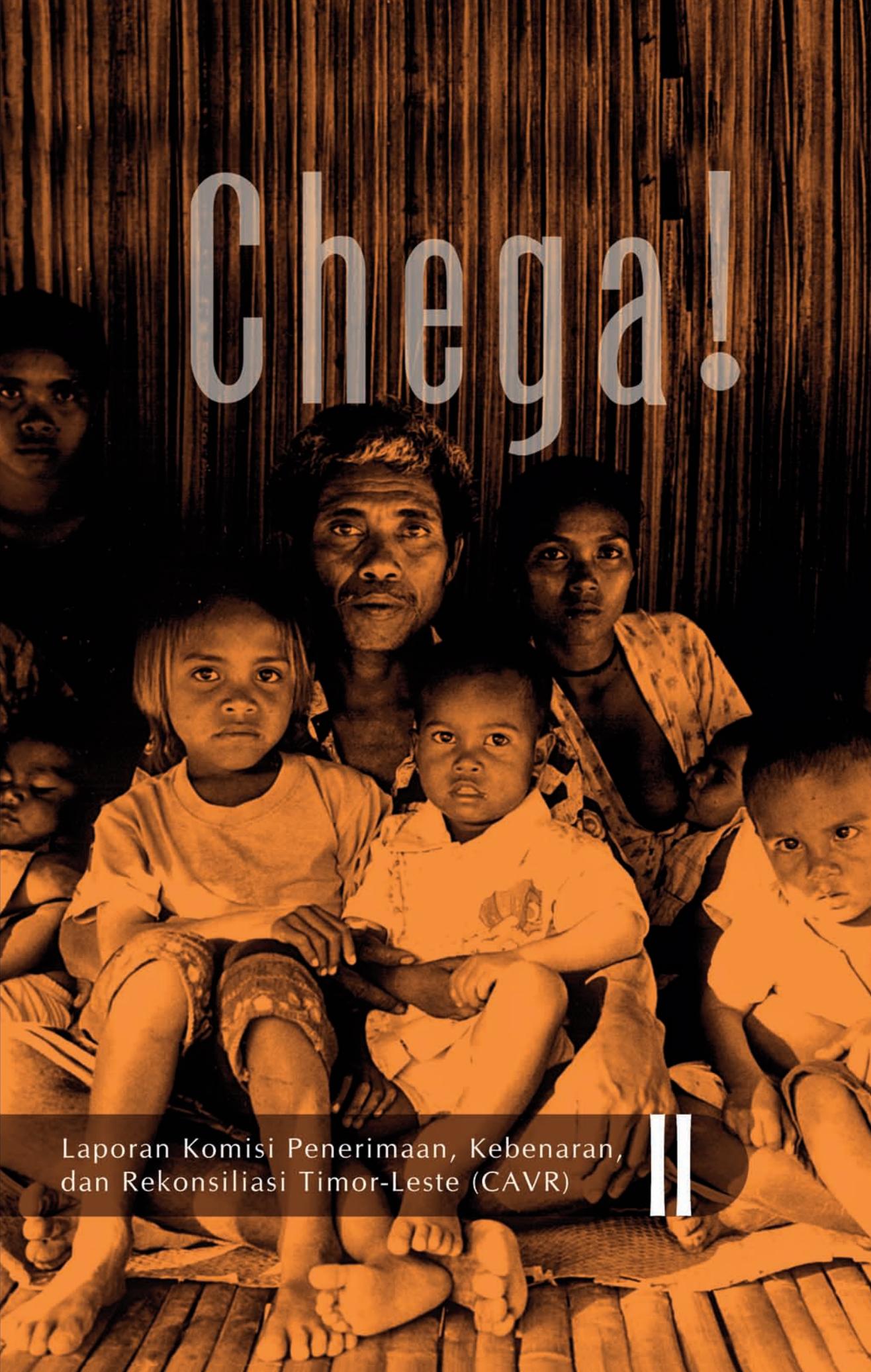
Laporan CAVR menandakan sebuah titik tonggak... Harapan tulus saya adalah agar (laporan) ini menjadi kontribusi tanpa henti untuk membangun bangsa Timor dan akan mencegah berulangnya peristiwa tragis di Timor-Leste dan tempat lain.

Kofi Annan,
mantan Sekretaris Jenderal PBB

KPG (KEPUSTAKAAN POPULER GRAMEDIA)
Gedung Kompas Gramedia, Blok 1 Lt. 3
Jl. Palmerah Barat 29 - 37, Jakarta 10270
Telp. 021-5365 0110, 5365 0111 ext. 3362-3364
Fax. 021-5369 8044



Chega!



Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR)



Chega!

V o l u m e I I :
Pelanggaran — Bagian 1

TERBITAN CAVR LAINNYA:

Buku-buku Audiensi Publik:

Penahanan politik
Perempuan dan konflik
Pemindahan paksa dan kelaparan
Pembantaian
Konflik politik internal 1974 – 1976
Penentuan nasib sendiri dan masyarakat internasional
Anak dan konflik

Buku-buku lain:

Rona Ami-Nia Lian (Dengarkan suara kami)
Penjara Comarca Balide: Sebuah 'Gedung Sakral'
Laporan Eksekutif Chega!

Video dan radio dokumenter:

Dalan ba Dame (Jalan Menuju Perdamaian)



<http://www.cavr-timorleste.org>
info@cavr-timorleste.org

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

V o l u m e I I :
Pelanggaran — Bagian 1

JAKARTA
KPG

Chega!

**Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste**

V o l u m e II : Pelanggaran - Bagian I

KPG: 950 04 10 0339

Cetakan pertama, Agustus 2010

Penyusun:

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

Foto sampul:

Poriaman Sitanggang

Pembaca akhir:

Rani Elsanti

Desain dan tata letak:

M. Roniyadi

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

**Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di
Timor-Leste - Volume II**

Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2010

xiv + 868 hlm; 150x230 mm

ISBN-13: 978-979-91-0245-4

Penerbitan buku ini didanai oleh Pemerintah Irlandia dan Jerman

Dicetak oleh PT Gramedia, Jakarta.

Isi di luar tanggungjawab percetakan.

Daftar isi

647 | Bab 7.1: Hak penentuan nasib sendiri

653 | Pendahuluan

- 653 | Kata pengantar
- 654 | Hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri
- 655 | Kewajiban negara-negara
- 656 | Konteks internasional
- 658 | Sumber-sumber

660 | Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tiga pemangku kepentingan utama

- 660 | Perserikatan Bangsa-Bangsa
- 662 | Portugal
- 670 | Indonesia
- 680 | Australia

692 | Dewan Keamanan, lima anggota tetap, dan Jepang

- 692 | Dewan Keamanan
- 699 | Cina
- 703 | Prancis
- 706 | Rusia (USSR)
- 710 | Inggris
- 716 | Amerika Serikat (AS)
- 729 | Jepang
- 735 | Kesimpulan

737 | Vatikan

- 737 | Pendahuluan
- 738 | Latar belakang keterlibatan Vatikan
- 738 | Gereja Katolik di Timor-Leste
- 739 | Dom José Joaquim Ribeiro (1966 – 1977)
- 740 | Dom Martinho da Costa Lopes (1977 – 1983)
- 744 | Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB (1983 – 2003)
- 746 | Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Timor-Leste pada 1989
- 750 | Kesimpulan

751 | Diplomasi Resistansi

- 751 | Partai-partai politik dan badan-badan payung
- 770 | Diaspora
- 774 | Kesimpulan

- 775** | Masyarakat sipil
 - 775** | Pendahuluan
 - 777** | Masyarakat sipil internasional
 - 804** | Masyarakat sipil Indonesia
 - 812** | Kesimpulan

- 814** | Temuan-temuan
 - 814** | Komunitas internasional
 - 816** | Pemangku kepentingan utama
 - 819** | Lampiran: Sikap pemberian suara dalam resolusi mengenai Timor-Leste di Sidang Umum PBB

833 | Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa

- 847** | Pendahuluan
 - 847** | Definisi
 - 850** | Metodologi
 - 851** | Tinjauan kuantitatif
 - 852** | Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh Resistansi
 - 852** | Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia

- 855** | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa selama konflik internal: 11 Agustus – 24 September 1975
 - 862** | Pembunuhan di luar hukum sebelum aksi bersenjata UDT 11 Agustus
 - 863** | Pembunuhan pada 11 Agustus, hari aksi bersenjata UDT
 - 866** | Pembunuhan di luar hukum setelah aksi bersenjata UDT, 12 – 17 Agustus
 - 871** | Pembunuhan di luar hukum antara 18 – 20 Agustus
 - 873** | Pembunuhan antara 21 Agustus dan 30 Agustus, periode besar konflik bersenjata internal
 - 877** | Pembunuhan tahanan dan pembunuhan lainnya pada September
 - 881** | Pembunuhan lainnya

- 883** | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa selama pendudukan Indonesia (1975 – 1999)
 - 883** | Pembunuhan di luar hukum oleh militer Indonesia sebelum invasi pada Desember 1975
 - 889** | Pembunuhan di luar hukum oleh militer Indonesia selama invasi Dili pada 7 – 8 Desember 1975
 - 910** | Pembunuhan di luar hukum oleh Fretilin setelah invasi Indonesia (Desember 1975 dan Februari 1976)

- 925 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa yang dilakukan ABRI setelah invasi Indonesia, 1976 – 1979
- 943 | Pembunuhan sesudah jatuhnya *bases de apoio*
- 1005 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh Fretilin/Falintil, 1976 – 1979
- 1040 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh ABRI/TNI, 1980 – 1984
- 1101 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh TNI, 1985 – 1989
- 1106 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh pasukan keamanan Indonesia, 1990 – 1998
- 1151 | Pelanggaran fatal oleh Fretilin/Falintil, 1980 – 1999
- 1166 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, 1999

1230 | Temuan-temuan

- 1231 | Konflik internal, 1974 – 1976
- 1236 | Pendudukan Indonesia, 1975 – 1999

..... 1287 | Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan

1295 | Pendahuluan

1298 | Definisi dan metodologi

- 1298 | Pemindahan
- 1300 | Kelaparan
- 1302 | Mengumpulkan informasi

1303 | Pengungsian dan kelaparan akibat konflik internal (1974-1975)

- 1303 | Pengungsian akibat persaingan politik (1974-1975)
- 1305 | Pengungsian yang disebabkan oleh konflik internal
- 1306 | Pelarian ke Timor Barat.
- 1309 | Pemindahan paksa ke Timor Barat
- 1310 | Jumlah pengungsi di Timor Barat
- 1311 | Kondisi dan bantuan kemanusiaan di Timor Barat
- 1313 | Kekurangan bahan makanan dan bantuan kemanusiaan di Timor-Leste
- 1313 | Kelaparan dan kematian

1314 | Pemindahan dan kelaparan selama pendudukan Indonesia (1975-1979)

- 1314 | Invasi, pemindahan, dan evakuasi 1975-1977
- 1324 | Hidup dan mati di pergunungan (1976-1978)
- 1338 | Dalam pelarian (1976-1978)

- 1355 | Menyerah, kamp, dan kelaparan (1978-1981)
- 1370 | Kamp-kamp permukiman
- 1381 | Tanggapan darurat kemanusiaan (1979-1980)

- 1397 | Pemindahan paksa dan kelaparan terlokalisir pada dasawarsa 1980-an
 - 1397 | Pembongkaran kamp-kamp permukiman: relokasi strategis
 - 1398 | Pemindahan pada dasawarsa 1980-an: pilihan-pilihan
 - 1403 | Redistribusi penduduk
 - 1406 | Relokasi setelah pemindahan: beberapa contoh
 - 1410 | Penahanan balasan dan hukuman kolektif: Ataúro dan kamp-kamp penahanan lainnya
 - 1424 | Alternatif selain penahanan di Ataúro: Raifusa dan Dotik

- 1432 | Pemindahan sebelum dan sesudah Jajak Pendapat 1999
 - 1434 | Gejolak awal (November 1998-Maret 1999)
 - 1440 | Perpindahan massal pertama, April 1999
 - 1449 | Hening sebelum badai (Mei sampai Agustus 1999)
 - 1456 | Pemindahan dan deportasi besar-besaran, September 1999
 - 1479 | Pengungsi di Timor Barat
 - 1484 | Kembali ke rumah

- 1485 | Temuan
 - 1487 | Konflik internal Agustus-September 1975
 - 1489 | Invasi
 - 1491 | Penghancuran bahan makanan dan binatang ternak
 - 1491 | Kehidupan dan kematian di pergunungan
 - 1494 | Kamp dan permukiman di bawah kontrol militer Indonesia
 - 1495 | Bantuan kemanusiaan
 - 1496 | Desa relokasi strategis dan penginterniran
 - 1498 | Pemindahan sebelum dan sesudah Jajak Pendapat 1999

Daftar tabel:

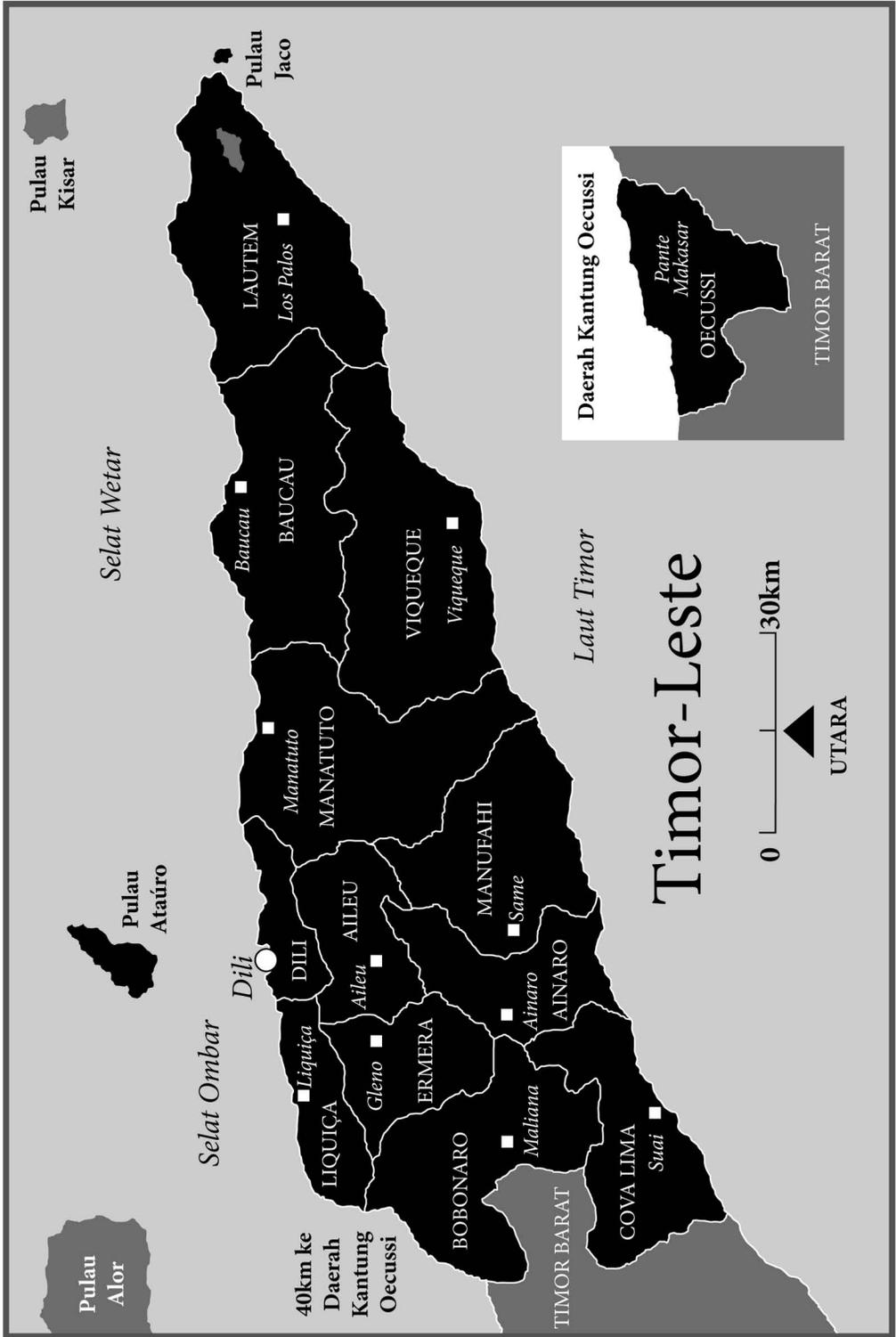
- 819** | Resolusi Sidang Umum dan bagaimana negara memberikan suara antara 1975 - 1982
- 860** | Rangkuman kesaksian komunitas lokal di enam desa selama konflik internal
- 890** | Para korban di sebelah Toko Lay, pagi 7 Desember 1975, yang dilaporkan kepada CAVR
- 890** | Para korban di rumah Li Nheu Ki, pagi 7 Desember 1975, yang dilaporkan kepada CAVR
- 891** | Warga etnis Cina lainnya yang terbunuh pagi 7 Desember 1975, yang dilaporkan kepada CAVR
- 895** | Korban yang berhasil diidentifikasi dari Gedung Assistencia, Caicoli, yang dilaporkan kepada Komisi
- 898** | Korban yang telah diidentifikasi di sekitar Matadouro pada 7 – 8 Desember 1975, yang dilaporkan ke Komisi
- 901** | Korban pembunuhan atau yang terakhir terlihat di pelabuhan pada 8 Desember 1975, yang teridentifikasi dan dilaporkan kepada Komisi
- 905** | Etnis Cina yang menghilang dan diduga telah dieksekusi di pelabuhan, 8 Desember 1975, yang dilaporkan kepada Komisi
- 907** | Korban yang berhasil diidentifikasi dari kejadian 8 Desember 1975 di Ailok Laran, yang dilaporkan kepada Komisi
- 909** | Warga sipil yang dibunuh dan mayatnya ditemukan di Dili, 7– 10 Desember 1975, yang dilaporkan kepada Komisi
- 910** | Total jumlah warga sipil yang dibunuh atau dieksekusi, dari 7-10 Desember 1975, seperti dilaporkan kepada Komisi
- 945** | Orang-orang yang dilaporkan telah berada dalam tahanan sebelum dihilangkan/ dibunuh
- 949** | Pembunuhan dan penghilangan di Quelicai 1978 - 1979
- 959** | Pembunuhan di Lautém 1978-79 menurut subdistrik dan kelompok
- 975** | Pembunuhan di luar hukum dan pemindahan paksa di Distrik Manufahi, 1978 - 1979
- 994** | Orang yang dilaporkan kepada CAVR telah dibunuh/dihilangkan setelah penahanan di Uatolari, Nov-Des 1978 dan Mar-Apr 1979
- 1002** | Pembunuhan di Distrik Manatuto, Februari-April 1979
- 1042** | Orang-orang yang dilaporkan telah dibunuh atau “dihilangkan” setelah serangan 10 Juni
- 1063** | Orang sipil yang dibunuh atau dihilangkan dari Ainaro dan Manufahi, 1982, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1067** | Orang-orang yang dibunuh di wilayah Kraras, September 1983, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1068** | Orang sipil yang dibunuh di Caraubalau, Viqueque, 16 September 1983, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1070** | Orang sipil yang dieksekusi di Tahu Bein, Viqueque, 17 September 1983, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1072** | Eksekusi dan penghilangan di wilayah Kraras, 1983, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1074** | Orang-orang yang dieksekusi dan hilang di Viqueque, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1078** | Orang-orang yang dieksekusi di Iliomar, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1081** | Orang-orang yang dieksekusi di Mehara, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1083** | Orang-orang yang dibunuh di Lore, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR

- 1084** | Orang-orang yang dieksekusi atau hilang di Lospalos, 1983, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1087** | Orang-orang yang dieksekusi di Muapitine, Desember 1983, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1088** | Orang-orang yang dieksekusi/hilang dari kecamatan Luro, 1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1088** | Pelanggaran mematikan dan penghilangan di Lautém, Agustus 1983-Maret 1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1089** | Orang-orang yang dihilangkan dari Desa Ossoala, 23 September 1983, seperti yang dilaporkan kepada CAVR
- 1091** | Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan di Baucau, 1983-1984, seperti yang dilaporkan kepada CAVR
- 1093** | Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan dari tahanan di Dili, 1983-1984, seperti yang dilaporkan kepada CAVR
- 1094** | Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan di Aileu, 1983-1984, seperti yang dilaporkan kepada CAVR
- 1095** | Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan di Manufahi, 1983-1984, seperti yang dilaporkan kepada CAVR
- 1096** | Orang-orang yang dieksekusi di Ainaro, 1984, seperti yang dilaporkan kepada CAVR
- 1098** | Nama-nama orang yang dieksekusi atau dihilangkan dari Koramil Bobonaro, 1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1100** | Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan di Distrik Covalima dan Bobonaro, 1984, seperti yang dilaporkan kepada CAVR
- 1101** | Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan di Liquiça, 1983-1984, seperti yang dilaporkan kepada CAVR
- 1104** | Ringkasan pelanggaran fatal acak terhadap penduduk sipil di wilayah Timur, 1985-1989
- 1105** | Ringkasan pelanggaran fatal sembarang terhadap penduduk sipil di luar wilayah Timur, 1985 – 1989
- 1138** | Ringkasan dakwaan dan hukuman terhadap sepuluh personil keamanan terkait peristiwa Santa Cruz
- 1150** | Pelanggaran fatal dan penghilangan warga sipil yang dilakukan ABRI, 1990- 1994, sebagaimana dilaporkan kepada CAVR
- 1150** | Pelanggaran fatal dan penghilangan warga sipil yang dilakukan ABRI, 1994- 1998, sebagaimana dilaporkan pada CAVR
- 1158** | Warga sipil dan Hansip/TBO yang dibunuh oleh Fretilin/Falintil, 1980-1984, yang dilaporkan pada CAVR
- 1160** | Warga sipil dan Hansip/TBO yang terbunuh oleh Fretilin/Falintil, 1985-1989, yang dilaporkan pada CAVR
- 1165** | Warga sipil dan Hansip yang terbunuh oleh Fretilin/Falintil, 1990-1999, yang dilaporkan pada CAVR
- 1170** | Pembunuhan dan penghilangan terhadap penduduk sipil oleh milisi dan TNI pada tahun 1999 yang telah dilaporkan kepada CAVR
- 1171** | Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh TNI dan kelompok-kelompok milisi secara bersama-sama, Januari-Maret, Mei 1999, Distrik Bobonaro
- 1172** | Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi, Januari-Maret, Mei 1999, Distrik Bobonaro

- 1173 | Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi, Januari-Mei 1999, Distrik Covalima
- 1185 | Pembunuhan di luar hukum yang dilaporkan kepada Komisi, Januari-Mei 1999
- 1188 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi, Juni hingga 30 Agustus 1999
- 1217 | Rangkuman kasus pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa sejak 1999 yang dilaporkan kepada komisi
- 1241 | Perkiraan jumlah pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan Indonesia dan para pasukan pembantunya
- 1304 | Contoh kesaksian mengenai pengungsian akibat persaingan politik 1974-1975, yang dikumpulkan oleh Komisi
- 1305 | Contoh kesaksian mengenai pemindahan terkait perang saudara, yang dikumpulkan oleh Komisi
- 1307 | Beberapa komunitas yang melarikan diri ke Timor Barat saat konflik antarpantai
- 1327 | Beberapa basis utama Resistansi
- 1357 | Data kepolisian Indonesia tentang jumlah penduduk, Oktober 1977- Mei 1978
- 1371 | Kamp permukiman pada akhir 1979
- 1381 | Angka kematian rata-rata di beberapa kamp permukiman, sebelum dan setelah datangnya bantuan internasional
- 1384 | Bantuan makanan oleh ABRI di kamp transit dan kamp permukiman, 1978
- 1405 | Perubahan populasi subdistrik 1970-1980
- 1410 | Rangkuman beberapa laporan terpilih dari diskusi komunitas
- 1418 | Pilihan kesaksian dari mereka yang selamat dari Atauro
- 1434 | Jajak Pendapat dan pemindahan penduduk sipil: anggal dan kejadian penting
- 1460 | Deportasi dan pemindahan Distrik Dili (milisi Aitarak dan Tim Makikit)
- 1465 | Deportasi dan pemindahan di Distrik Covalima (milisi Laksaur)
- 1473 | Deportasi dan Pemindahan di Distrik Lautém (milisi Tim Alfa)
- 1473 | Deportasi dan Pemindahan di Distrik Baucau (milisi Tim Saka)
- 1474 | Deportasi dan Pemindahan di Distrik Manatuto (milisi Mahadomi)
- 1475 | Deportasi dan Pemindahan di Distrik Viqueque (milisi Naga Merah)
- 1477 | Deportasi dan Pemindahan di Distrik Oecussi (milisi Sakunar)

Daftar grafik:

- 856 | Pembunuhan yang dilaporkan, berdasarkan intitusi pelaku dan institusi korban, 1975-1976
- 1230 | Total pembunuhan yang terdokumentasi di Timor-Leste
- 1411 | Jumlah pemindahan ke Atauro, 1974-1999
- 1433 | Perkiraan kejadian pemindahan di Timor-Leste pada 1999
- 1440 | Perkiraan jumlah rumahtangga yang berpindah pada 1999



Chega!

Bagian 7.

Pelanggaran — Bagian 1



Chega!

Bagian 7
Bab 7.1.

Hak penentuan nasib sendiri

Bab 7.1. Hak penentuan nasib sendiri

653 | Pendahuluan

- 653 | Kata pengantar
- 654 | Hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri
- 655 | Kewajiban negara-negara
- 656 | Konteks internasional
- 658 | Sumber-sumber

660 | Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tiga pemangku kepentingan utama

- 660 | Perserikatan bangsa-bangsa
- 662 | Portugal
 - 670 | Kesimpulan
- 670 | Indonesia
 - 679 | Kesimpulan
- 680 | Australia
 - 681 | Kebijakan Australia hingga 1974
 - 683 | Kebijakan Australia 1974 - 1975
 - 687 | Kebijakan Australia 1975 - 1998
 - 689 | Beralihnya kebijakan Australia
 - 691 | Kesimpulan

692 | Dewan Keamanan, lima anggota tetap, dan Jepang

- 692 | Dewan Keamanan
- 699 | Cina
- 703 | Prancis
- 706 | Rusia (USSR)
- 710 | Inggris
- 716 | Amerika Serikat (AS)
- 729 | Jepang
- 735 | Kesimpulan

737 | Vatikan

- 737 | Pendahuluan
- 738 | Latar belakang keterlibatan Vatikan
- 738 | Gereja Katolik di Timor-Leste

- 739 | Dom José Joaquim Ribeiro (1966-1977)
- 740 | Dom Martinho da Costa Lopes (1977-1983)
- 744 | Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB (1983-2003)
- 746 | Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Timor-Leste pada 1989
 - 748 | Sikap Vatikan tentang Timor-Leste dan hubungan Vatikan dengan Indonesia
- 750 | Kesimpulan

..... 751 | Diplomasi Resistansi

- 751 | Partai-partai politik dan badan-badan payung
 - 753 | Kebijakan internasionalisasi Fretilin
 - 756 | Pemanfaatan hukum internasional
 - 757 | Upaya diplomasi di PBB
 - 761 | Voting 1982 di PBB
 - 763 | Pembentukan kembali partai-partai
 - 765 | Dari perbedaan ke persatuan: pencarian persatuan dan perdamaian
- 770 | Diaspora
- 774 | Kesimpulan

..... 775 | Masyarakat sipil

- 775 | Pendahuluan
 - 776 | Terminologi
- 777 | Masyarakat sipil internasional
 - 777 | Tahap pertama: Tantangan awal dan permulaan, 1974 - 1978
 - 785 | Tahap kedua: Krisis dan awal baru, 1978 - 1983
 - 790 | Tahap ketiga: Membangun kembali dukungan masyarakat sipil, 1983 - 1991
 - 795 | Tahap keempat: Titik-titik balik, 1991 - 1998
 - 803 | Tahap kelima: Penentuan nasib sendiri, 1998 - 1999
- 804 | Masyarakat sipil Indonesia
 - 805 | Tahun-tahun awal
 - 807 | Tahun 1990-an
- 812 | Kesimpulan

..... 814 | Temuan-temuan

- 814 | Komunitas internasional
- 816 | Pemangku kepentingan utama

Daftar tabel:

819 | **Tabel A** : Resolusi Sidang Umum dan bagaimana negara memberikan suara antara
1975 - 1982

Hak penentuan nasib sendiri

7.1.

Pendahuluan

Kata Pengantar

1. Bab ini berfokus pada hak rakyat Timor Leste atas penentuan nasib sendiri, dan sejauh mana hak ini ditegakkan atau diingkari, khususnya di kalangan masyarakat internasional.
2. Hak atas penentuan nasib sendiri merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan tidak terpisahkan dari diri seorang manusia. Hak ini membentuk pasal pertama dalam dua instrumen utama hak asasi manusia (Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), mengingat pentingnya hak ini bagi tatanan internasional dan perlindungan hak-hak individu. Mahkamah Pengadilan Internasional mengakui hak atas penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia yang paling penting, dan “menyangkut semua negara.”¹
3. Penentuan nasib sendiri adalah juga fundamental karena merupakan hak kolektif suatu bangsa untuk dapat menjadi diri sendiri. Perjuangan untuk dapat menikmati hak ini di atas segala hak yang lain menjadi isu pokok yang sentral dari periode mandat CAVR. Periode ini bermula ketika kekuasaan kolonial yang lama memutuskan pada 1974 untuk mengakui hak ini setelah 14 tahun mengingkarinya, dan berakhir dengan keputusan kekuasaan kolonial yang baru untuk mengakui hak ini pada 1999 setelah 24 tahun pengingkaran. Sementara itu, rakyat Timor Leste melakukan pengorbanan luarbiasa untuk mendapatkan hak ini. Pewujudan hak ini adalah hakiki untuk kelangsungan hidup, identitas, dan nasib Timor Leste.
4. Bab ini mempelajari catatan lembaga-lembaga internasional utama dan pemerintahan-pemerintahan di dunia, dalam menaati berbagai kewajiban yang sudah disepakati secara internasional, untuk melindungi dan memajukan hak ini demi kepentingan rakyat Timor Leste. Bab ini akan melihat tiga pemangku kepentingan utama dalam isu tersebut—Portugal, Indonesia, dan Australia—ditambah dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota tetapnya, yaitu Cina, Prancis, Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Jepang juga akan dipelajari karena ia anggota terpilih di Dewan Keamanan di dalam tahun-

tahun penting 1975 dan 1976, dan juga merupakan mitra utama Indonesia di dalam ekonomi regional. Bab ini juga akan melaporkan tentang peranan penting Vatikan serta kontribusi penting para diplomat dan diaspora Timor Leste bersama masyarakat sipil internasional terhadap realisasi penentuan nasib sendiri.

Hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri

5. Hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri merupakan hak yang sangat jelas dan diakui secara resmi oleh masyarakat internasional. Dewan Keamanan dan Sidang Umum PBB dalam banyak kesempatan memperkuat eksistensi hak ini serta tanggungjawab semua negara di dunia untuk menghormatinya sejak 1960.² Pengakuan atas hak ini menetapkan legitimasi ‘persoalan Timor-Leste’ dalam hukum internasional, dan dengan sangat mencolok membedakannya dengan berbagai klaim atas penentuan nasib sendiri oleh kelompok-kelompok lain.

6. Penentuan nasib sendiri merupakan hak kolektif yang dimiliki oleh ‘segala bangsa’ untuk menentukan nasib politik dan teritorialnya. Hak ini memberi bangsa Timor Leste tiga hal: untuk a) menentukan status politiknya melalui tindakan memilih bebas; b) menjalankan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara bebas; dan c) untuk memanfaatkan sumberdaya dan kekayaan alamnya secara bebas.³

7. Hak atas penentuan nasib sendiri memberikan hak kepada masyarakat Timor untuk mengakhiri situasi kolonial mereka, dengan menentukan kehendak secara bebas antara kemerdekaan, asosiasi bebas dengan negara yang ada, atau integrasi dengan negara yang ada. Keputusan atas kehendak tersebut haruslah dibuat melalui tindakan ekspresi yang murni dan bebas. Agar dapat sah dan diterima secara internasional, keputusan mengenai masa depan suatu masyarakat harus dihasilkan melalui proses yang terpupuk oleh penerangan, terbuka, adil dan demokratis, bebas dari campurtangan atau ancaman pihak luar, dijalankan secara tidak memihak, dan sebaiknya diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena hak ini adalah milik seluruh bangsa Timor-Leste secara bersama dan bukannya kelompok tertentu, penerapan hak ini haruslah representatif. Bangsa Timor-Leste juga memiliki hak untuk berjuang atas penentuan nasib sendiri, dan untuk menerima dukungan bagi perjuangan mereka ini. Negara-negara boleh menanggapi permintaan untuk bantuan moral dan material seperti ini.* Negara-negara tidak diperkenankan menggunakan kurangnya kesiapan politik, ekonomi, sosial, atau pendidikan sebagai alasan untuk membenarkan penundaan suatu kemerdekaan.⁴

8. Hak masyarakat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri juga meliputi hak untuk bebas dari penindasan oleh kekuatan asing, dan hak untuk secara bebas menentukan bagaimana sumberdaya alam mereka seharusnya diperlakukan dan digunakan.

* Kedua tuntutan ini berdasarkan atas Resolusi Majelis Umum 2105, 20 Desember 1965 dan UN Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the UN, Resolusi Sidang Umum 2625 (XXV), Pleno Sidang Umum Sesi 1883, 24 Oktober 1970. Lihat Suzannah Linton, Konsultan Penasihat Hukum pada CAVR, “The Right to Self-Determination in International Law,” submisi kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.

Kewajiban negara-negara

9. Pengakuan internasional bahwa Timor-Leste memiliki hak atas penentuan nasib sendiri membebaskan berbagai kewajiban kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai kuasa pemerintahan di Timor-Leste, Portugal terikat oleh Pasal 73 Piagam PBB dan Resolusi-Resolusi Sidang Umum, untuk menerima sebagai suatu 'amanat suci' kewajibannya untuk meningkatkan setinggi-tingginya kesejahteraan bangsa Timor, dan:

- Untuk memastikan kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan bagi masyarakat Timor-Leste, dan melindungi mereka dari penyalahgunaan wewenang;
- Untuk mengembangkan kemampuan memerintah diri sendiri, mempertimbangkan aspirasi politik masyarakat, dan membantu mereka dalam mengembangkan lembaga politik yang bebas; dan
- Untuk menyampaikan informasi kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai situasi di dalam wilayah tersebut.

10. Selain itu, semua negara memiliki kewajiban tertentu mengenai hak atas penentuan nasib sendiri. Semua negara harus menghormati dan menggalakkan hak masyarakat atas penentuan nasib sendiri⁵ serta mengambil aksi positif untuk memfasilitasi realisasinya.⁶ Khususnya, semua negara harus "menahan diri dari turut campur dalam masalah internal dari negara lain, sehingga berpengaruh buruk terhadap kemampuan untuk merealisasikan hak atas penentuan nasib diri sendiri."⁷ Negara-negara harus menahan diri dari tindakan paksa yang menceraikan suatu masyarakat dari haknya atas penentuan nasib diri sendiri.⁸

11. Di dalam keadaan saat hak suatu masyarakat atas penentuan nasib diri sendiri ditolak, semua negara berkewajiban mengakui keadaan tersebut sebagai tidak sesuai hukum, dan diharuskan tidak melakukan tindakan apapun yang menolong atau membantu mempertahankan keadaan tersebut.⁹

12. Pada 1975, kemudian lagi pada 1976, Dewan Keamanan dan Sidang Umum PBB menyerukan "semua negara" untuk menghormati hak tak terpisahkan bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, serta menghormati persatuan dan keutuhan wilayah Timor Portugis.¹⁰ Semua negara anggota PBB terikat untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut.¹¹ Dewan Keamanan juga mewajibkan beberapa ketentuan kepada Indonesia dan Portugal, di mana kedua negara ini juga terikat pada resolusi-resolusi tersebut. Dewan Keamanan menuntut agar Indonesia menarik pasukan bersenjata dari Timor Leste,¹² dan agar Portugal bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memungkinkan masyarakat Timor secara bebas menjalankan hak mereka atas penentuan nasib sendiri.¹³

13. Komisi mengambil kesimpulan bahwa kewajiban negara-negara adalah sebagai berikut:

- Menghormati hak atas penentuan nasib sendiri, dan menggalakkan realisasi terhadapnya;

- Tidak menggunakan kekerasan memberangus hak atas penentuan nasib diri sendiri;
- Tidak melakukan apapun yang bisa melemahkan hak suatu masyarakat atas penentuan nasib diri sendiri;
- Memberi bantuan kepada orang-orang yang ikut serta dalam perjuangan demi penentuan nasib diri sendiri;
- Tidak memberikan bantuan kepada negara yang terlibat dalam melakukan penindasan terhadap hak atas penentuan nasib diri sendiri;
- Tidak mengakui keabsahan sebuah situasi yang timbul dari penolakan atas hak terhadap penentuan nasib diri sendiri.

Konteks internasional

14. Masyarakat internasional telah menyetujui prinsip dan prosedur-prosedur yang akan mengatur dekolonisasi Timor Portugis; tapi, banyak pemerintahan negara-negara penting mengambil pendekatan yang berbeda pada dasawarsa 1970-an dibanding pendekatan mereka di akhir dasawarsa 1990-an.

15. Sejumlah faktor eksternal telah merugikan kepentingan Timor dan proses hukum pada dasawarsa 1970-an. Hal ini mencakup pemusatan perhatian atas konflik ideologis yang luarbiasa di tingkat internasional, dan berbagai krisis domestik dengan bermacam-macam signifikansi di dalam negara-negara yang paling terlibat dengan Timor-Leste. Persoalan-persoalan ini memang sangat penting dan telah memengaruhi jiwa manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi, mereka juga telah berdampak bagi Timor-Leste dengan membelokkan perhatian dari permasalahan sesungguhnya dan menyamarkan, atau bahkan memutarbalikkan, sikap-sikap resmi.

16. Permasalahan yang dominan pada masa itu adalah Perang Dingin. Ini adalah persaingan terbuka namun terbatas, yang berkembang setelah Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya di Barat dan Uni Soviet beserta sekutunya, sampai runtuhnya Uni Soviet (USSR) pada 1991. Persaingan Barat - Timur ini merupakan persaingan ideologis antara sistem kapitalis dan komunis, namun selain itu juga merupakan persaingan komersial dan militer. Persaingan ini membagi Eropa, yang dilambangkan dengan jelas oleh Tembok Berlin yang mengisolasi Berlin Barat dari Berlin Timur dan Jerman Timur yang dikuasai komunis. Ia juga membagi Dunia Ketiga, ketika negara-negara ini menjadi ajang kompetisi para adikuasa setelah tercapai suatu keseimbangan kekuasaan di Eropa. Uni Soviet mendukung dekolonisasi. Kompetisi ini tidak serta-merta menghasilkan konflik militer langsung antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, namun memang melibatkan aksi militer atau perang atasnama atau perang proksi (proxy war) di sejumlah negara, termasuk di kawasan Asia. Persaingan ini menimbulkan ketegangan tinggi yang dirasakan di semua lapisan masyarakat di banyak negara, dan memengaruhi opini publik dalam banyak persoalan. Hal ini juga mengakibatkan pengeluaran militer besar-besaran serta perlombaan senjata yang antara lain menghasilkan penumpukan peluru kendali dan persenjataan nuklir yang telah mengancam kelangsungan dunia. Masyarakat

internasional terbagi menjadi Blok Timur, Barat, dan Non-Blok seputar persoalan ini, dan memberikan suara mereka di PBB sesuai dengan dikte geopolitik ketimbang inti permasalahan yang sedang dibahas.

17. Dengan latar belakang seperti ini, pencapaian komunis di Asia, yang memuncak pada 1975 dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam dan kemenangan komunis di Laos dan Kamboja, menyiagakan Amerika Serikat dan sekutunya, serta tidak menguntungkan kepentingan Timor-Leste. Indonesia dan pemerintahan yang sangat antikomunis lainnya di kawasan ini, termasuk Australia, Selandia Baru, dan negara-negara anggota ASEAN, bertekad bekerjasama dalam membendung pergerakan lebih jauh komunisme. Perkembangan sayap kiri di Portugal dan Timor Portugis dipandang dengan derajat kekhawatiran yang berbeda-beda, khususnya di Indonesia. Meskipun demikian, hal ini juga menguntungkan Indonesia yang dapat mengeksploitasi persoalan ini melawan Fretilin, untuk memaksimalkan peran penting mereka bagi negara-negara Barat sebagai benteng melawan komunisme, dan untuk mendapat dukungan politik, militer, serta komersial yang kuat dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat.

18. Perkembangan politik pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an juga menguntungkan Timor-Leste secara tidak langsung. Selama periode ini muncul berbagai gerakan politik dan gerakan masyarakat sipil yang baru yang mendukung perdamaian, hak asasi manusia, pelucutan senjata, pembangunan, dan keadilan sosial—khususnya sebagai akibat kekecewaan terhadap Uni Soviet dan tragedi-tragedi Perang Dingin seperti keterlibatan Amerika Serikat di Perang Vietnam. Gerakan-gerakan ini menuntut adanya suara atau demokrasi partisipatoris dan terdorong oleh kepedulian akan masa depan planet ini, apabila hanya para adikuasa, pemerintahan, dan bisnis besar yang dibiarkan membuat keputusan. Pencarian akan alternatif semacam ini juga dirasakan di komunitas keagamaan di seluruh dunia, termasuk dalam Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan Kedua pada tahun 1960-an. Gerakan-gerakan ini menjadi tulang punggung dukungan masyarakat sipil internasional bagi Timor-Leste.

19. Ketiadaan dukungan resmi bagi kemerdekaan Timor juga diperburuk dengan anggapan bahwa arus dekolonisasi utama sudah usai. Sebagian besar koloni besar milik kekuatan Eropa—Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Italia, dan Belgia—sudah merdeka atau, dalam kasus Portugal, sedang dalam proses menjadi merdeka. Dekolonisasi dimulai di Timur Tengah pada dasawarsa 1920-an dan diikuti oleh gelombang kedua di Asia pada dasawarsa 1940-an dan 1950-an ketika India mendapat kemerdekaan dari Inggris, dan Indonesia dari Belanda. Proses ini memuncak pada dasawarsa 1960-an dengan gelombang emansipasi ketiga ketika tak kurang dari 42 negara, sebagian besar di Afrika, mendapat kemerdekaan dan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konteks ini, persoalan seperti Timor dan Makau dipandang oleh sebagian kalangan sebagai sisa-sisa kolonialisme yang tidak mampu menyokong diri sendiri sebagai negara merdeka, dan paling baik diatasi melalui penggabungan ke dalam entitas yang lebih besar, dalam sebagian kasus ke bekas-bekas koloni yang berbatasan langsung atau memiliki kesamaan-kesamaan lain. Penggabungan Goa ke dalam India

sering dijadikan contoh untuk hal ini. Dari sudut pandang ini, masa depan Timor secara historis sudah ditentukan, dan hanya bisa dibayangkan sebagai bagian dari Indonesia, walaupun pada kenyataannya wilayah ini lebih besar daripada beberapa koloni Portugal di Afrika dan banyak negara-negara yang baru merdeka lainnya.

20. Di tingkatan politik nasional, tiga pemangku kepentingan utama—Portugal, Indonesia, dan Australia—mengalami berbagai tantangan internal dan ketidakstabilan selama masa 1974 - 1975 yang kritis. Persoalan-persoalan dalam negeri menambah kesibukan para pembuat kebijakan utama dan, setidaknya dalam kasus Portugal, terbukti merugikan bagi Timor-Leste.

21. Dalam masa ini, Portugal mengalami kudeta militer sayap kiri, percobaan kudeta balasan, dan beberapa pergantian pemerintahan. Selain amat disibukkan oleh nasibnya sendiri, Portugal juga terlibat dalam dekolonisasi koloni-koloni utamanya di Afrika. Indonesia terancam oleh keruntuhan ekonomi akibat krisis Pertamina selama beberapa bulan pada masa itu. Ini terjadi ketika Pertamina, perusahaan minyak negara Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Ibnu Sutowo, mengalami kesulitan membayar utang-utang luar negerinya yang besar. Krisis ini semakin mengancam ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada minyak dan kepercayaan para investor asing. Harga minyak yang terus meningkat mampu mengangkat Indonesia dari kemiskinan ke kesejahteraan yang relatif, dan sangat penting bagi kelangsungan program-program politik Presiden Soeharto. Para penasihat presiden mengatakan bahwa Timor tidaklah begitu penting dibandingkan dengan krisis Pertamina, dan bahwa krisis ini menyita sembilan puluh persen waktu presiden dalam bulan-bulan menjelang invasi Indonesia.¹⁴ Kesehatan Presiden Soeharto, yang selalu menjadi soal penting dalam pemerintahan yang sangat tersentralisasi, juga menjadi masalah menjelang akhir 1975 ketika ia menjalani operasi kandung empedu. Australia pun mengalami ketidakstabilan politik yang tidak biasa selama masa ini. Pemerintahan Partai Buruh Perdana Menteri Gough Whitlam dibubarkan pada November 1975, setelah terjadi krisis konstitusi yang menyisakan suatu pemerintahan sementara pada masa invasi Indonesia. Kebijakan luar negeri menjadi masalah yang tidak begitu penting dalam masa pemilihan umum yang pahit, yang diadakan pada 13 Desember 1975.

Sumber-sumber

22. Komisi sedapat mungkin mendasarkan penelitiannya pada sumber-sumber tangan pertama. Komisi memberitahu mengenai penyelidikannya kepada sebagian besar pemerintahan dan lembaga-lembaga yang disebut dalam bab ini dan meminta masukan dari mereka. Komisi menulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Indonesia, Perdana Menteri Portugal dan Australia, Pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Republik Rakyat Cina, dan Persatuan Kerajaan Inggris. Komisi tidak menerima satu pun balasan resmi, namun mendapatkan bantuan yang cukup berarti dari sejumlah perwakilan negara-negara ini yang berbasis di Timor-Leste. Komisi juga menghubungi pihak-pihak di Moskow dan Vatikan mengenai akses terhadap dokumentasi.

23. Masalah umum yang dihadapi baik oleh Komisi maupun berbagai pemerintahan adalah tantangan dalam mendapatkan catatan-catatan dari masa 30 tahun yang lalu. Mendapatkan dan mengakses catatan-catatan ini dari masa pra-komputer di masa 1970-an merupakan tantangan administratif dan finansial, yang dipersulit oleh perlunya memberi identifikasi yang tepat mengenai dokumen-dokumen dan tanggal-tanggal. Dalam sebagian besar kasus, penyelidikan yang lebih menyeluruh masih perlu dilakukan, dan dalam kasus di mana belum ada undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi atau di mana akses masih dibatasi, hal ini pun mungkin tidak akan berhasil.

24. Tapi, keputusan beberapa pemerintahan untuk membuka walau sedikit dari informasi mereka mengenai Timor-Leste, telah sangat membantu Komisi dalam mengemban tanggungjawabnya mencari kebenaran. Dokumentasi yang dibuka oleh pemerintah Australia untuk periode 1974 - 1976 telah sangat berharga, seperti halnya laporan dua jilid "Relat6rios da Descoloniza73o de Timor" mengenai 1974 - 1975 yang disediakan oleh Pemerintah Portugal. Komisi juga dibantu oleh informasi rahasia yang dibuka kepada Arsip Keamanan Nasional oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Perpustakaan Presiden Ford dan Carter, empat jilid bahan-bahan rahasia yang dibuka oleh Pemerintah Selandia Baru, serta dokumen-dokumen yang dibuka oleh Pemerintah Inggris dan disediakan kepada Komisi oleh Hugh Dowson. Komisi juga banyak mengandalkan catatan debat-debat yang informatif mengenai Timor di PBB, Kongres AS, dan Parlemen Australia, serta koleksi dokumen-dokumen dasar mengenai persoalan Timor yang disunting oleh Heike Krieger dan diterbitkan oleh University of Cambridge. Ini diperkaya lagi oleh laporan mengenai penentuan nasib sendiri yang dipersiapkan untuk Komisi oleh Profesor Geoffrey C. Dunn, Universitas Nagasaki, Jepang, serta kesaksian tertulis dan lisan yang diberikan kepada Komisi oleh para mantan diplomat yang berdinasi di PBB dan Pemerintah Amerika Serikat dan Australia.*

25. Catatan-catatan ini merupakan bagian penting dari khazanah sejarah Timor-Leste yang baru kali ini dapat dilihat oleh sebagian besar orang Timor-Leste. Komisi sangat berterima kasih atas segala kebaikan hati dan kerjasama yang diterimanya dalam menyusun bahan-bahan ini, dan sesuai dengan mandatnya, telah menyimpan dan menyusun arsip-arsip ini untuk bahan referensi di masa mendatang. Komisi berharap bahwa pemerintahan-pemerintahan yang belum melakukan hal ini akan menyumbang catatan-catatannya atau membantu peneliti Timor atau yang lain untuk mengakses arsip-arsip mereka.

* Komisi juga berterima kasih kepada John Waddingham, Julia Davey, dan Peter Carey atas nasihat dan kontribusi mereka pada proses riset bab ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tiga pemangku kepentingan utama

Indonesia sudah melakukan studi akan kemungkinan reaksi internasional terhadap intervensi Indonesia di Timor Portugis...[Indonesia] sudah mengambil kesimpulan, bahwa negara-negara ASEAN lainnya tidak akan memprotes. Tidak akan ada reaksi signifikan dari Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Hubungan dengan Portugal tidaklah penting bagi Indonesia. Referensi apapun tentang hal ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa akan ditangani oleh Indonesia dengan memuaskan. Negara-negara Afrika Hitam akan bereaksi, tetapi ini tidak akan memiliki dampak serius bagi Indonesia. Hanya dua negara yang akan memprotes secara keras—Cina dan Australia. Di dalam kasus Cina, bentuk protes ini akan merupakan hal yang rutin dan stereotipikal (“sebuah reaksi wajib”). Sedangkan di Australia, kelompok-kelompok tertentu dan media akan menimbulkan kegemparan. Pemerintah Australia akan merasa harus melakukan protes. Ini akan disesali oleh Indonesia. Tetapi semua itu akan hilang ditelan waktu.¹⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa

26. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada 1945 setelah Perang Dunia Kedua, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, membangun kerjasama antarnegara, serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan hak-hak asasi manusia. Negara-negara anggotanya terikat oleh Piagam PBB, sebagai kesepakatan internasional yang memaparkan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai anggota komunitas internasional.

27. Piagam PBB mengakui prinsip-prinsip dari hak atas penentuan nasib sendiri dan, seperti yang tercantum dalam Bab XI piagam tersebut, mewajibkan anggotanya yang tanggung jawab atas wilayah-wilayah atau koloni-koloni yang tidak berpemerintahan sendiri, untuk menerima suatu ‘amanat suci’ guna mendorong pemajuan bangsa-bangsa itu beserta lembaga-lembaga politiknya, dan memberitahu komunitas dunia mengenai langkah-langkah yang diambil dalam persiapan penentuan nasib sendiri.

28. Gerakan menentang kolonialisme semakin kuat bergulir setelah Perang Dunia Kedua. Baik bangsa-bangsa yang terbelenggu maupun kekuatan kolonial sepakat bahwa kolonialisme, sebagai suatu sistem yang didasarkan atas dominasi dan ketidaksetaraan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental PBB dan tidak dapat dipertahankan dalam dunia yang sedang berubah. Pada 1960, untuk mempercepat proses tersebut, PBB mengumumkan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negeri-negeri dan Bangsa-bangsa Kolonial. Deklarasi ini diadopsi oleh mayoritas besar anggota-anggota PBB. Deklarasi itu menyatakan:

Segala bangsa berhak atas penentuan nasib sendiri; berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan nasib sendiri dan bebas mengupayakan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.*

29. Begitu pentingnya dokumen ini bagi Timor-Leste, sehingga setiap resolusi Sidang Umum dan Dewan Keamanan mengenai persoalan Timor-Leste mencantumkan sebagai pendahuluan.

30. Pada hari yang sama, Sidang Umum mengemukakan berbagai prosedur di mana pemerintahan diri sendiri secara total dapat diraih oleh wilayah-wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri. Resolusi 1541 (XV) memberi tiga pilihan: kemerdekaan, asosiasi bebas, atau integrasi dengan negara merdeka. Resolusi ini mensyaratkan bahwa integrasi hanya dapat terjadi jika wilayah yang dimaksud sudah memiliki lembaga-lembaga politik yang bebas dan maju, dan bahwa integrasi adalah hasil dari keinginan bebas masyarakatnya yang diungkapkan melalui pemungutan suara dewasa universal yang terbuka.†

31. Pada 1961, PBB membentuk Komite Khusus Dekolonisasi untuk memperkuat Deklarasi tersebut.‡ Peran utamanya adalah untuk menasihati Sidang Umum mengenai cara-cara untuk mendorong dekolonisasi dan kemerdekaan, serta memberitahu Dewan Keamanan mengenai perkembangan di wilayah-wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri yang berpotensi mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Komite ini tidak memiliki kuasa untuk menegakkan resolusi-resolusi atau rekomendasinya, tapi diberi mandat untuk bepergian ke seluruh dunia, untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan mengumpulkan informasi langsung mengenai situasi di wilayah-wilayah itu, termasuk kehendak bangsanya mengenai masa depan mereka. Pembahasan mengenai dekolonisasi juga dilakukan dalam Komite Keempat Sidang Umum.

32. Karena inisiatif-inisiatif ini, dekade 1960-an sering disebut sebagai dekade dekolonisasi dan kemerdekaan. Tidak kurang daripada 42 negara, yang sebagian besar di Afrika, memperoleh kemerdekaan dan keanggotaan PBB selama dasawarsa 1960-an, lebih banyak dari dekade-dekade lainnya dalam sejarah PBB. Walau demikian, Timor tidak turut merdeka sampai 40 tahun kemudian.

33. Hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri diakui pada 15 Desember 1960, ketika Sidang Umum PBB mencantumkan nama Timor sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, bersama dengan koloni-koloni Portugal lainnya.¹⁶

* Resolusi SU 1514 (XV). UN Doc. A.RES/1514 (XV) Sembilan anggota abstain: Australia, Belgia, Republik Dominika, Prancis, Portugal, Spanyol, Union of South Africa, Inggris, dan Amerika Serikat.

† Prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh anggota-anggota di dalam menentukan adanya sebuah kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan disebut di dalam Pasal 73e dari Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa, Prinsip IX, digabungkan ke Resolusi SU 1541 (XV), 15 Desember 1960

‡ Komite itu juga disebut sebagai Komite 24 berdasarkan jumlah anggotanya. Nama lengkapnya adalah Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples.

Ini adalah pertama kalinya bangsa Timor-Leste diakui oleh Sidang Umum sebagai bangsa yang berhak atas penentuan nasib sendiri. Portugal menolak menerima keputusan itu dan tetap bersikeras di hadapan tantangan-tantangan internasional sampai terjadi perubahan rezim pada 1974. Walau demikian, keputusan PBB ini sangat signifikan. Meskipun perlu waktu untuk menerapkannya dan menemui berbagai macam rintangan sampai pada 1999, keputusan ini secara radikal mengubah status hubungan Timor dengan Portugal dan komunitas internasional. Keputusan ini mengangkat takdir sebuah bangsa kecil dari ketidakjelasan kolonial menjadi persoalan tanggungjawab internasional, dan PBB serta lembaga-lembaganya menjadi forum pertanggungjawaban utama untuk masa depan bangsa ini.

Portugal

34. Portugal bergabung dengan PBB pada 1955. Amandemen pada 1951 terhadap Konstitusi Portugis 1933 membatalkan Undang-Undang Kolonial 1930, dan menetapkan koloni-koloni Portugis sebagai ‘provinsi seberang lautan’. Penduduk pribumi koloni-koloni ini tidak diikutkan dalam pembahasan mengenai perubahan status de jure mereka. Portugal bersikap abstain ketika Sidang Umum menerima Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negeri-negeri dan Bangsa-bangsa Kolonial pada 1960, menolak melapor kepada PBB sebagaimana yang diwajibkan dalam Bab XI Piagam PBB, dan menentang inisiatif-inisiatif PBB lainnya termasuk resolusi-resolusi Dewan Keamanan pada 1963 yang mengkritik Portugal atas ketidakpatuhannya dan kembali mempertegas hak atas penentuan nasib sendiri Timor Portugis. Rezim Salazar-Caetano bersikeras bahwa Portugal adalah negara “pluri-continental” di mana bangsa-bangsanya menjalankan penentuan nasib sendiri melalui partisipasi dalam proses politik Portugis. Perdana Menteri Portugis, António de Oliveira Salazar, juga percaya bahwa proses dekolonisasi global ini dimotori oleh negara-negara Dunia Ketiga dan komunis, yang menginginkan disintegrasi Eropa Barat, dan bahwa Barat menuruti pihak mayoritas melalui PBB.¹⁷ Kebuntuan ini berlanjut hingga 1974.

35. Situasi sosio-ekonomi di Timor Portugis pada periode ini terbelakang dan pada dasarnya lumpuh. Konsul Australia untuk wilayah itu, James Dunn, melaporkan pada 1963:

Timor Portugis adalah wilayah yang miskin dan sangat terbelakang. Tidak ada industri hilir, sumberdaya mineralnya sangat minim, dan produksi pertanian subsistennya juga rendah. Sangat sedikit yang dilakukan oleh Portugis untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan ini, dan sejauh ini tidak ada bukti adanya upaya sungguh-sungguh untuk mengatasi hal ini di masa mendatang.

36. Dunn percaya situasi itu begitu menyia-siakan orang Timor sehingga mereka mungkin akan lebih memilih untuk bergabung dengan Indonesia yang baru merdeka tapi miskin. Ia menulis:

Orang Portugis di Timor tidak banyak mendapat dukungan riil dari penduduk aslinya... sebagian besar mungkin akan lebih memilih berada di bawah Indonesia daripada terus dikuasai Portugis.¹⁸

37. Ada beberapa kemajuan pada awal 1970-an di bawah Gubernur Fernando Alves Aldeia. Namun, sistem ini sesungguhnya sudah begitu bangkrut sehingga José Ramos-Horta, sekembalinya dari pengasingannya di Mozambik, berkomentar:

Saya melihat negeri saya tercinta sama saja seperti sebelum saya pergi (pada 1970). Timor-Leste, di bawah Portugis, tampak duduk diam dalam sejarah. Denyut nadi pembangunan tidak terasa di sini.¹⁹

38. Pada November 1975, PBB menggambarkan situasi sosio-ekonomi Timor-Leste dengan istilah-istilah yang tidak kalah menyedihkan:

Menurut publikasi resmi Portugis, di antara faktor-faktor yang merintangai pembangunan wilayah ini ialah rendahnya pendapatan per kapita, kurangnya infrastruktur transportasi dan energi, kurangnya tradisi komersial di antara penduduk pribumi, kekurangan pekerja yang berkualifikasi teknis di berbagai tingkatan sektor publik dan pribadi, kurangnya kemampuan finansial, defisit dalam perdagangan, dan kuatnya pemusatan di proses produksi akan satu produk saja, yaitu kopi.²⁰

39. Kondisi bangsa yang amat menyedihkan ini dibicarakan lebih jauh di kalangan internasional oleh diplomat-diplomat yang mengunjungi wilayah itu setelah 1975. Setelah kunjungan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Timor Portugis Vittorio Winspeare Guicciardi ke Timor pada awal 1976, Pemerintah Australia melaporkan:

Winspeare [Guicciardi] begitu terkejut melihat 'keterbelakangan' sedikit orang yang ia temui di daerah-daerah perdesaan di pinggiran kota dan mengatakan bahwa sangat sulit membayangkan mereka dapat memahami segala persoalan seputar tindakan penentuan nasib sendiri. Ia begitu 'terkesima' bagaimana 'primitifnya' kondisi sebagian orang, contohnya yang ia temui di wilayah kantong Oecussi. Ia mengatakan bahwa ia yakin hidup mereka tidak banyak berubah setelah 500 tahun kekuasaan Portugis.²¹

40. Menyusul perubahan rezim pada 25 April 1974, Pemerintah Portugis yang baru menerima kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Piagam PBB, dan pada 24 Juli 1974 menganulir Pasal 1 Konstitusi 1933, yang mengklasifikasikan Timor-Leste sebagai wilayah nasional dan mengakui haknya atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Portugal secara resmi menyampaikan perubahan radikal kebijakan ini kepada PBB sebanyak empat kali antara Agustus dan Desember 1974.²² Dalam resolusinya yang diadopsi pada 1974, Sidang Umum menyambut penerimaan

oleh Portugal “akan prinsip sakral penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan serta penerapannya yang tanpa syarat terhadap semua bangsa yang ada di bawah dominasi kolonial Portugis”.²³

41. Sesuai dengan prinsip utama kebijakan ini, yaitu menghormati pilihan bebas rakyat, Gubernur Portugis, Kolonel Mario Lemos Pires, secara konsisten berupaya memperlakukan semua partai politik dengan sama selama 1975. Ia tidak menyetujui tindakan-tindakan Kolonel Maggiolo Gouveia, Komandan Polisi Portugis yang bergabung dengan UDT pada awal terjadinya perang saudara, dan dalam dua kesempatan menolak mengakui Fretilin sebagai satu-satunya perwakilan rakyat Timor yang sah—pada September setelah Fretilin mengambilalih administrasi pemerintahan dan kemudian pada November setelah Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan. Untuk alasan yang sama, Portugal juga tidak mengakui deklarasi integrasi dengan Indonesia oleh empat partai.²⁴

42. Setelah mengakui pada November bahwa ia tidak memiliki “cara untuk menjamin normalisasi situasi di Timor”,²⁵ Portugal menyerahkan persoalan tersebut kepada PBB untuk diatasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur PBB. Setelah invasi Indonesia, Portugal memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia dan memohon kepada Dewan Keamanan untuk segera menghentikan intervensi militer Indonesia dan memperoleh “penyelesaian konflik secara damai dan ternegosiasi, serta proses dekolonisasi di bawah pengawasan PBB”.²⁶ Walaupun secara fisik telah menarik diri dari Timor, Portugal mengakui kewajibannya sebagai kuasa pemerintahan untuk mendorong penentuan nasib sendiri, dan menyebutkan hal ini secara eksplisit di dalam konstitusinya.²⁷

43. Prinsip ini terus dipertahankan selama terjadinya konflik[†] dan ditegakkan dalam beberapa kesempatan, walaupun menghadapi tekanan politik yang menentang. Ada dua contoh yang dapat dikemukakan. Pada Juni 1976, Jenderal Portugal Morais da Silva mengadakan negosiasi rahasia dengan perwakilan pemerintah Indonesia, yakni Jenderal Benny Moerdani dan Harry Tjan mengenai pembebasan 23 tawanan Portugis yang ditahan di Indonesia sejak perang saudara, yang menjadi kekhawatiran umum di Portugal. Sebagai imbalannya, Morais da Silva menawarkan kemungkinan pengakuan kedaulatan Indonesia di Timor-Leste oleh Portugal. Usulnya ditolak oleh presiden terpilih, Jenderal António Ramalho Eanes, dan perdana menteri baru, Mario Soares, yang menegaskan bahwa negosiasi mengenai kedaulatan itu bergantung pada tindakan penentuan nasib sendiri yang dapat diterima secara internasional.²⁷ Dalam kesempatan lainnya, pada 1987, Portugal dan PBB mempertimbangkan untuk mengamati pemilihan umum Indonesia di Timor-Leste sebagai cara untuk

* Pasal 307 Konstitusi Republik Portugal, 2 April 1976, menyatakan: “Portugal terikat pada tanggungjawabnya, sesuai dengan hukum internasional, untuk menjunjung serta menjaga hak Timor-Leste atas kemerdekaan”. Pada 7 Juli 1989, Pasal 293 diubah sehingga berbunyi “untuk menjunjung serta menjaga hak Timor-Leste atas hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan.” Krieger, hal. 36.

† Penerimaan Portugal atas kewajiban internasionalnya bagi Timor Timur bertentangan dengan penerimaannya terhadap pengambilalihan India atas Goa pada 1961 dan pelepasan Spanyol atas Sahara Barat kepada Maroko pada November 1975. Keduanya terjadi tanpa adanya proses penentuan nasib sendiri.

menilai sikap rakyat Timor terhadap integrasi. Setelah sebuah kampanye protes oleh kalangan masyarakat sipil, Portugal pun memperbarui komitmennya terhadap penentuan nasib sendiri.

44. Pada 1991, Portugal menegaskan komitmen pada prinsip ini ketika ia mengajukan Australia ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice; ICJ) atas dasar bahwa Perjanjian Celah Timor antara Australia dengan Indonesia telah melanggar, antara lain, hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. ICJ memutuskan tidak bisa bertindak sebagai hakim di dalam perdebatan ini. Tapi, ICJ menyatakan bahwa dalam pandangan Portugal dan Australia, wilayah Timor-Leste tetap merupakan wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri dan masyarakatnya memiliki hak atas penentuan nasib diri sendiri.²⁸

45. Keputusan Portugal untuk mendekolonisasi Timor-Leste, untuk mempertahankan dukungan secara prinsip atas penentuan nasib sendiri, dan untuk tidak mengakui kedaulatan Indonesia selama 25 tahun, telah berperan sangat penting bagi nasib Timor-Leste. Meskipun demikian, walaupun sudah berkali-kali menyatakan komitmen kebijakan sejak 1974, secara umum Portugal gagal menjelmakan prinsipnya menjadi dukungan yang berkelanjutan sampai menjelang akhir konflik. Portugal telah salah mengelola proses dekolonisasi pada 1974 dan 1975, dan umumnya tidak efektif sebagai 'kuasa pemerintahan' selama sebagian besar masa pendudukan Indonesia itu.

46. Letnan Kolonel Lemos Pires bersaksi kepada Komisi bahwa banyak faktor yang memengaruhi gagalnya proses dekolonisasi pada masa 1974 - 1975, termasuk agresi yang dilakukan oleh Indonesia dan ketidakdewasaan partai-partai politik baru di Timor. Tapi, satu faktor kunci untuk semua ini adalah kegagalan Portugal untuk melibatkan komunitas internasional sebelum dan setelah 1974.

47. Mantan gubernur itu menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan dekolonisasi adalah peristiwa revolusioner yang sangat mendadak dan mengejutkan baik bagi Portugal maupun Timor-Leste. Keduanya tidak siap dan tidak memiliki perangkat yang baik untuk menjalankan peran mereka masing-masing, dan seakan terjerumus ke dalam kekacauan karena keputusan itu. Hal ini sebagian besar merupakan akibat kegagalan rezim Salazar-Caetano mematuhi kewajiban internasionalnya dalam mempersiapkan diri beserta koloni-koloninya untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan cara yang sistematis dan positif, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pengabaian Portugal atas tanggungjawabnya dan kekukuhannya meneruskan status quo yang melanggar kebijakan PBB menggagalkan terjadinya dekolonisasi yang sah serta mengakibatkan kehancurannya sendiri dan pergolakan, baik di dalam negeri maupun di wilayah-wilayahnya di seberang lautan. Hal ini juga menimbulkan adanya pandangan di Portugal bahwa kemerdekaan bukan pilihan politik dan ekonomi yang dapat berjalan bagi Timor-Leste, dan bahwa wilayah itu seharusnya bersatu dengan Indonesia, walaupun harus melalui proses penentuan nasib sendiri.

48. Walaupun keputusannya untuk melakukan dekolonisasi dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip internasional, Portugal menolak menginternasionalisasi proses itu dengan mencari bantuan kepada PBB. Pada Februari 1975, misalnya, delegasi Pemerintah Portugis di Timor bertemu dengan Komisi Nasional Dekolonisasi di Lisabon, dan menegaskan “perlunya segera menetapkan kebijakan dengan jelas, [dan] membela internasionalisasi persoalan Timor melalui PBB, khususnya meminta negara-negara Dunia Ketiga sebagai satu-satunya pelindung terhadap intervensi militer Indonesia.” Komisi ini memutuskan bahwa permintaan kepada PBB untuk menahan Indonesia harus digunakan sebagai jalan terakhir. Namun, Portugal lebih memilih melakukan pembicaraan rahasia putaran ketiga dengan Indonesia.[†] Penolakan untuk melibatkan PBB ini, setidaknya sampai setelah invasi Indonesia terjadi, merupakan kesalahan besar. Mantan Gubernur Lemos Pires mengatakan kepada CAVR:

Perserikatan Bangsa-Bangsa seharusnya menjadi pemain utama dalam proses ini... Saya kira akan lebih baik bagi Portugal [dan] proses dekolonisasi Timor-Leste apabila Portugal menginternasionalisasi persoalan ini sejak kebutuhan akan penentuan nasib sendiri diakui pada 1974... Pemerintah Portugis tidak meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa datang ke wilayah ini... Saya kira ini adalah kesalahan.[‡]

49. Alih-alih mencari bantuan internasional, Portugal justru memutuskan mengelola proses itu sendiri dengan sedikit sumberdaya militer dan uang, tanpa rencana, dan sambil kewalahan dengan runtuhnya imperium Portugal di Afrika dan konflik di dalam negeri. Akibat ketidakstabilan politik yang mewabah di Portugal, Timor menderita akibat tidak adanya kepemimpinan yang tegas di saat krisis. Pemerintahan di Portugal tidak berdaya, misalnya, selama berlangsungnya Gerakan Militer UDT pada Agustus, dan lagi pada November menjelang invasi Indonesia. Letnan Kolonel Lemos Pires mengatakan kepada Komisi:

Tidak ada kebijakan dekolonisasi bagi Timor-Leste. Dukungan dana yang diberikan sangat sedikit... Pasukan militer yang dialokasikan teramat minim.²⁹

* João Loff Barreto, *The Timor Drama*, 1981, hal. 25-26. Pada Juni 1975 Komisi kembali menolak menginternasionalisasikan isu tersebut dan pada September Portugal meyakinkan Indonesia bahwa PBB adalah jalan terakhir. Barreto, hal. 53. Letnan Kolonel Portugis, Lopes Pires, seorang pengawas militer dalam pertemuan Komisi Nasional Dekolonisasi menulis: “Saya memahami [internasionalisasi] ini sebagai satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menghindari apa yang kita semua ingin hindari, melihat situasi sistematis yang memburuk”. Barreto, hal. 63. Menteri Luar Negeri Australia, Don Willesee, mengatakan kepada Parlemen pada 8 Oktober 1975: “Sampai pada saat itu, Pemerintah Portugal... belum menyerahkan proposal resmi apapun untuk mediasi PBB di Timor Portugis”. (http://www.whitlam.org/collection/2000/20001012_East_Timor_74-75/index.html).

† Pejabat-pejabat Portugal dan Indonesia bertemu secara rahasia di Lisabon pada 14 Oktober 1974, di Paris pada 14 November 1974, dan di London pada 9 Maret 1975.

‡ Mario Lemos Pires, kesaksian diberikan pada diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003. PBB mengikuti proses itu dan mengadakan pertemuan Komite Khusus Dekolonisasi di Lisabon pada Juni 1975, tapi Portugal tidak menyerahkan isu tersebut sampai pada Desember 1975.

50. Kurangnya pasukan Portugis dapat dipahami dalam konteks revolusi Pergerakan Pasukan Bersenjata (Movimento das Forças Armadas, MFA), namun membuat gubernur relatif tidak berdaya pada masa perang saudara, dan wilayah itu pun menjadi semakin rentan terhadap agresi Indonesia.³⁰ Situasi sial yang dihadapi Portugal ini semakin tersorot jelas, ketika Gubernur Lemos Pires mundur ke Ataúro dan kemudian ke Portugal.

51. Portugal sangat menyadari adanya rencana Indonesia yang semakin agresif untuk menyatukan Timor, dan mencoba meredam tindakan Indonesia melalui jalur-jalur diplomatik. Meskipun demikian, selama periode ini Portugal tampaknya menganggap Indonesia sebagai bagian dari solusi ketimbang bagian dari masalah. Perundingan-perundingannya dengan Indonesia sampai terjadinya invasi pada 7 Desember 1975 umumnya terjadi secara rahasia dan kooperatif, dengan pemahaman akan kepentingan-kepentingan Indonesia, termasuk jaminan bahwa persoalan tersebut tidak akan diinternasionalisasikan, dan khususnya tanpa kritikan umum mengenai maksud-maksud militer Indonesia dan campurtangannya dalam hubungan dalam negeri Timor Portugis.

52. Menteri Luar Negeri Melo Antunes konon tidak menggunakan kesempatan dalam perundingan di Roma dengan Indonesia pada 1-2 November 1975, untuk memperlihatkan bukti yang diberikan oleh wartawan Portugis, Adelino Gomes, bahwa Indonesia telah mengumpulkan pasukan di Timor Barat dan sudah melintas masuk ke Timor Portugis.³⁰ Komunike dari pertemuan itu menggambarkan pertemuan itu sebagai “terbuka,” tapi tidak menyebutkan aktivitas militer Indonesia. Pertemuan itu justru terfokus pada perlunya diadakan perundingan dengan partai-partai politik Timor “untuk mengakhiri pertikaian bersenjata” dan melindungi “kepentingan Indonesia”. Dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pada 28 dan 29 November 1975, Portugal mempersalahkan Fretilin atas situasi itu dan tidak menyebutkan Indonesia secara langsung.³¹ Baru setelah invasi besar-besaran pada 7 Desember 1975, ketika sudah sangat terlambat, Portugal secara langsung memprotes aksi-aksi militer Indonesia, kemudian memutuskan hubungan diplomatik dan membawa isu itu kepada Dewan Keamanan.

53. Mantan Gubernur Lemos Pires mengatakan kepada Komisi bahwa menurutnya Australia seharusnya dapat lebih membantu Portugal dan Timor pada saat itu. Pada 1975, dia, anggota-anggota Parlemen Australia, UDT, dan Fretilin berulang-kali membuat permohonan agar konsulat Australia, yang ditutup pada 1971, dibuka kembali sehingga ada kehadiran internasional dan dapat memberi laporan langsung kepada Australia mengenai situasi yang terjadi. David Scott bersaksi kepada Komisi bahwa permohonan ini ditolak oleh Pemerintah Australia pada enam kesempatan.³² Menurut Gough Whitlam yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, “(Portugal) tidak pernah kapan pun... membuat permohonan spesifik kepada Australia atau kekuatan regional lainnya.”³³

.....
* Portugal mengurangi pasukannya dari kurang-lebih 3.000 orang pada 1974 sampai kira-kira 200 orang pada pertengahan 1975. José Ramos-Horta menulis: “Dalam pandangan saya, pengurangan pasukan adalah kesalahan yang paling berdampak merusak yang dilakukan oleh Portugis pada 1974”. Funu: The Unfinished Saga of East Timor, Red Sea Press, Trenton, New Jersey, 1987, hal. 48.

54. Portugal bersikap relatif pasif di kancah internasional selama tahun 1970-an dan awal 1980-an. Richard Dalton, seorang pejabat dalam Misi Inggris di PBB, mengamati bahwa pada 1976:

Portugal terus diam. Secara pribadi mereka mengatakan bahwa mereka akan menerima apapun yang bisa diterima PBB secara utuh. Mereka tidak berusaha menyelesaikan apapun.³⁴

55. Kehampaan inisiatif ini sangat kontras dengan agresi diplomatik Indonesia dan menyebabkan terjadinya kehilangan suara di PBB serta melemahnya dukungan bagi Timor-Leste. Pemerintah Portugis terkadang lamban atau tidak tanggap terhadap peristiwa-peristiwa penting di Timor-Leste. Contohnya adalah ketika Portugal gagal memprotes penyerangan militer Indonesia di Timor-Leste, yang diikuti oleh kegagalan gencatan senjata pada 1983. Hal ini memicu kritik samar-samar dari José Ramos-Horta:

Kelalaian kriminal dan kepengecutan politik [Portugal] adalah dua hal yang dalam delapan tahun terakhir turut menyebabkan hilangnya blok suara yang mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Setelah masa singkat setahun di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Pinto Balsemão, ketika Pemerintah Portugal memang melakukan upaya sungguh-sungguh untuk menarik perhatian komunitas internasional akan tragedi bangsa Timor-Leste, kita kini kembali lagi ke kesunyian dan pelarian yang sudah menjadi sikap pejabat Portugis sejak 1974 sampai 1981.³⁵

56. Beberapa pertanda positif adanya komitmen yang agak terlambat muncul pada dekade 1980-an, dan memiliki momentum yang semakin besar pada dekade 1990-an. Pada 1982, di bawah Presiden Ramalho Eanes, Portugal mulai membahas persoalan ini secara sistematis serta mengerahkan kementerian luar negeri dan diplomat-diplomatnya. Pada 1982 itu juga, Majelis Nasional Portugis membentuk Komite Khusus untuk Pendampingan Situasi di Timor-Leste. Di samping menunjukkan konsensus antarpantai mengenai persoalan tersebut, Komite memfasilitasi internasionalisasi persoalan Timor-Leste oleh wakil-wakil Portugis di berbagai forum, termasuk Komite Khusus Dekolonisasi PBB.

57. Satu kemajuan besar terjadi pada Juni 1986 ketika Portugal bergabung dengan Komisi Ekonomi Eropa (European Economic Commission, EEC) dan dengan Parlemen Eropa pada tahun berikutnya. Ini merupakan keterlibatan Portugal yang pertama dalam sebuah organisasi lintas-negara yang signifikan. Dipimpin oleh Presiden Mario Soares, dan didorong oleh tumbuhnya persatuan dalam Resistansi Timor, Portugal memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini untuk menggalang dukungan di antara rekan-rekan Eropanya, terutama Irlandia,* Yunani, dan Italia.

* Menyusul footage televisi mengenai pembantaian Santa Cruz dan aktivitas komunitas yang dipimpin oleh Kampanye Solidaritas Irlandia Timor-Leste (East Timor Ireland Solidarity Campaign, ETISC), yang

Kegiatan resmi semakin meningkat selama dekade 1990-an, didorong antara lain oleh tanggapan publik di Portugal terhadap demonstrasi yang terjadi pada kunjungan Paus Yohanes Paulus II, dampak emosional pemuda Timor yang berdo'a dalam bahasa Portugis selama pembantaian Santa Cruz 1991, serta penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian pada 1996. Contohnya, pada 1993, Portugal berperan besar dalam diterimanya oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB suatu resolusi positif mengenai Timor-Leste. Dalam apa yang dideskripsikan oleh seorang diplomat Amerika Serikat sebagai “salah satu saat yang paling dramatis di sidang tahun ini”, Portugal, dengan bantuan dari bekas koloni-koloninya, mendapatkan dukungan dari AS, Kanada, dan Australia untuk resolusi tersebut. Misi AS di Jenewa melaporakan:

Diloloskannya Resolusi Timor Leste menunjukkan titik puncak akan usaha yang luarbiasa besar dari Pemerintah Portugis, yang memainkan peranan sangat gigih di dalam dialog antara EC-Indonesia, menangkis tekanan yang cukup besar—termasuk dari teman-teman terdekatnya—untuk menerima penggunaan bahasa yang kompromistis.³⁶

58. Portugal kembali ke panggung utama bersama Indonesia dalam negosiasi-negosiasi yang bermuara pada Kesepakatan 5 Mei 1999. Pembicaraan antara Portugal dan Indonesia yang berdasar pada Resolusi Sidang Umum 37/30, tidak mengalami banyak kemajuan sejak 1983; namun, menyusul keputusan Kofi Annan untuk mengaktifkan kembali proses itu pada 1997, Portugal bekerja langsung dengan Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal untuk Timor-Leste, Jamsheed Marker, dan berpegang teguh pada kebijakan penentuan nasib sendiri yang selalu diutarakannya. Menurut Duta Besar Marker, Perdana Menteri Guterres dan Menteri Luar Negeri Jaime Gama menegaskan bahwa “mereka tidak dapat menerima penyelesaian yang tidak berdasar pada pilihan bebas rakyat Timor”.³⁷ Hal ini dicapai melalui Kesepakatan 5 Mei 1999 dan pemungutan suara pada Agustus, dan Portugal memainkan peran penting dalam kedua peristiwa itu.

59. Portugal tidak secara resmi melepaskan diri sebagai ‘kuasa pemerintahan’ di Timor-Leste. Setelah perdebatan di Lisabon menghadapi Kesepakatan 5 Mei, diputuskan untuk tidak membesar-besarkan masalah, agar tidak membahayakan atau memperlambat jalannya negosiasi yang sensitif itu menjelang tindakan penentuan nasib sendiri pada 1999. Alih-alih, disetujui bahwa dukungan Portugal terhadap tindakan-tindakan yuridis dan yang dapat diterima secara internasional, yang akan berujung pada kemerdekaan, akan mengakhiri statusnya sebagai “kekuasaan pemerintahan”. Tindakan-tindakan tersebut adalah penandatanganan Kesepakatan 5 Mei 1999 (selama prinsip-prinsip keadilan [due process] dipenuhi), dukungan bagi pembentukan dan berjalannya UNTAET sebagai pemerintahan transisi,³⁸ dan pengakuan atas Republik Demokratik Timor-Leste.

dibentuk di Dublin pada 1992, Irlandia mendukung isu Timor-Leste mulai dari presiden sampai bawahannya. Menteri Luar Negeri Irlandia David Andrews, berperan aktif dalam Uni Eropa dan ditunjuk sebagai utusan khusus Uni Eropa untuk Timor-Leste.

60. Pada 8 Mei 2002 Sidang Umum memutuskan “untuk menghapus Timor-Leste dari daftar ‘Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri’ setelah mendapatkan kemerdekaannya”.³⁹

Kesimpulan

61. Portugal mempunyai tanggungjawab utama, yaitu mempersiapkan dan memfasilitasi dekolonisasi di Timor, sesuai dengan kewajiban-kewajibannya kepada PBB dan rakyat Timor. Kegagalannya di bawah rezim Salazar-Caetano untuk menjalankan tanggungjawab ini dan mempersiapkan masa depan bangsa Timor tanpa Portugal, patut disesalkan dan merupakan pelanggaran hak atas penentuan nasib sendiri. Hal ini juga mengikis hak atas kemerdekaan dengan memperkuat pandangan umum bahwa Timor-Leste yang merdeka tidak dapat eksis secara ekonomi dan politik, dan hanya dapat bertahan melalui penyatuan dengan Indonesia.

62. Perubahan kebijakan Portugal pada 1974 untuk mendukung penentuan nasib sendiri, serta keteguhannya berpegang pada prinsip ini selama masa pendudukan Indonesia, merupakan hal yang sangat penting bagi nasib Timor-Leste. Meskipun demikian, Portugal gagal menjalankan tanggungjawabnya kepada rakyat Timor-Leste selama periode kritis 1974 - 1975 dan sesudahnya. Walaupun Timor secara geografis merupakan ketiga terbesar dari enam wilayah Portugal, Timor berada di urutan bawah dalam daftar prioritas Portugal. Bagi Portugal, periode ini tampaknya menandakan akhir perannya ketimbang menjadikannya aktif mengambil tanggungjawab baru. Pemerintah pusat tidak menyediakan sumberdaya yang cukup kepada perwakilan lokalnya, tidak pula mengamankan wilayah itu di tengah ancaman agresi yang jelas dari luar, bahkan terlalu mengakomodasi posisi Indonesia, dan menolak menginternasionalisasi isu tersebut. Jumlah nyawa yang hilang akibat kelalaian ini sangat besar. Kepasifan dan kebimbangan ini terus mewarnai kegiatan diplomatiknya hingga pertengahan 1980-an, walaupun ada kewajiban-kewajiban konstitusional dan internasional serta petisi yang terus-menerus dari rakyat Timor-Leste dan masyarakat sipil Portugis untuk pembelaan yang lebih meyakinkan bagi kepentingan bekas koloninya.

63. Mario Lemos Pires, Gubernur Timor Portugis yang terakhir, menjalankan tugasnya pada 1974 dan 1975, dengan sikap terhormat dan berprinsip di hadapan tantangan-tantangan yang berat. Komisi mengakui peran Mario Lemos Pires selama masa yang kritis ini.

Indonesia

64. Indonesia mendapat dukungan dari PBB dalam perjuangannya untuk kemerdekaan dari Belanda, dan bergabung dengan badan dunia itu pada 1950. Di bawah Presiden Sukarno, Indonesia menjadi pelopor dekolonisasi yang lantang. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menyatakan:

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

65. Pemerintah Indonesia baik di bawah Presiden Sukarno maupun Presiden Soeharto secara resmi mendukung hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri dan tidak mengklaim hak teritorial atas koloni itu.

66. Dalam serangkaian pernyataan kepada Sidang Umum antara 1954 dan 1962, yang berkaitan dengan sengketa atas Irian Barat antara Indonesia dan Belanda, para pejabat Indonesia berulang-kali menekankan bahwa batas-batas nasional Indonesia adalah batas-batas bekas wilayah Hindia Belanda. Pada 1961, misalnya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, mengatakan:

Mengenai pulau besar Borneo...yang bagian utaranya merupakan wilayah Inggris, dan sama halnya mengenai setengah pulau Timor, yang milik Portugis, kami tidak memiliki klaim teritorial apapun; karena yang kami anggap sebagai milik Indonesia dan wilayah Indonesia adalah tidak lain dan tidak bukan seluruh wilayah bekas koloni Hindia Belanda.⁴⁰

67. Pada 1960, Indonesia mendukung Deklarasi PBB mengenai 'Pemberian Kemerdekaan bagi Negara dan Bangsa Kolonial' dan resolusi Sidang Umum yang mengakui Timor Portugis sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri. Indonesia mendukung resolusi-resolusi PBB selanjutnya, yang mengecam praktik-praktik kolonial Portugal dan kegagalannya memenuhi kewajibannya di bawah Piagam PBB. Wakil Ketua Dewan Penasihat Presiden Sukarno, Ruslan Abdulgani, berkata dalam sebuah pawai yang diadakan di Jakarta pada 1961:

Isilah hati kalian dengan kebencian tidak hanya terhadap penjajahan Portugis, tapi juga terhadap segala penjajahan yang masih ada di bumi Asia dan Afrika"; dan menambahkan bahwa "mata dan hati [Indonesia] ditujukan kepada Timor Portugis dan Goa [yang] masih berada di bawah kekuasaan penjajahan."⁴¹

68. Pemerintah Australia yakin bahwa kehadiran rezim kolonial yang terus-menerus di dalam kepulauan Indonesia akan memprovokasi Presiden Sukarno untuk menumpas sisa-sisa kolonialisme terakhir di lingkungannya, dan Australia menganjurkan kepada Portugal untuk membangun wilayah itu dan kepada Indonesia untuk tidak menggunakan kekuatan. Meskipun demikian, ketertarikan Sukarno pada Timor umumnya hanya berupa wacana dan tidak bisa disamakan dengan kampanye-kampanye 'ganyang Malaysia' atau Irian Barat.

* Presiden Soeharto mengutip Pembukaan UUD 1945 ini dalam pernyataannya kepada perwakilan Pemerintahan Sementara Timor Timur, menanggapi petisi mereka untuk integrasi dengan Indonesia, 7 Juni 1976; dalam Krieger, hal. 48.

Dalam sebuah kunjungan ke Lisabon pada 1961, ia konon mengatakan kepada Perdana Menteri Portugis, Salazar, bahwa Indonesia menghormati kedaulatan Portugis di wilayah itu.⁴²

69. Kebijakan-kebijakan ini dilanjutkan di bawah Presiden Soeharto Pada Oktober 1974, dalam debat pertama di Komite Keempat PBB sejak terjadi perubahan rezim di Portugal, perwakilan Indonesia menyatakan:

Indonesia ingin melihat bangsa Timor Portugis menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri secara teratur dan damai, sesuai dengan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negara dan Bangsa Kolonial.

70. Dia menambahkan bahwa Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk integrasi, tetapi “hubungan semacam itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia yang, antara lain, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan”.⁴³ Duta Besar Indonesia untuk PBB, Anwar Sani, mengulangi sikap ini dalam sebuah pertemuan Komite Khusus Dekolonisasi PBB yang diadakan di Lisabon pada Juni 1975.

71. Namun, pada kenyataannya Indonesia telah memutuskan sebelum akhir 1974 bahwa hanya ada satu hasil penentuan nasib sendiri yang dapat diterima. Pada Desember, Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, seperti dikutip oleh kantor berita resmi Indonesia Antara, mengatakan bahwa rakyat Timor hanya memiliki dua pilihan: “tetap di bawah Portugis atau bergabung dengan Indonesia.” Kemudian ia mengatakan bahwa pilihan dengan Portugal tidak mungkin, karena pilihan itu “selain menambah beban Portugal, juga akan merupakan bentuk baru kolonialisme”; dan menyatakan, bahwa kemerdekaan akan “tidak realistis” karena “keterbelakangan dan kelemahan ekonomi penduduknya”.⁴⁴

72. Penasihat utama Soeharto, Harry Tjan, memastikan keputusan ini kepada Pemerintah Australia. Pada Februari 1975 dia memberi tahu Kedutaan Besar Australia bahwa:

Pemerintah Indonesia sudah membuat suatu keputusan bahwa, cepat atau lambat, Timor Portugis harus menjadi bagian dari Indonesia. Ini merupakan keputusan bulat oleh semua tokoh terkemuka Indonesia yang terlibat, termasuk presiden. Yang masih perlu diputuskan adalah kapan, dan bagaimana, hal ini harus diwujudkan. Seperti yang ia katakan, ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi akan terjadi. Pemerintah Indonesia akan terlebih dahulu mencoba segala cara yang memungkinkan sebelum berpaling ke solusi militer. Ia mengatakan bahwa ini adalah ‘tindakan terakhir’.⁴⁵

73. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Woolcott, menyebutkan kembali hal ini dalam sebuah analisis rahasia penting mengenai persoalan ini, yang ditulis pada Januari 1976 untuk Perdana Menteri Australia yang baru, Malcolm Fraser. Ia menuliskan:

Indonesia tidak akan dihalangi untuk mencapai tujuan fundamental kebijakan (penggabungan) ini. Indonesia sudah berketetapan dengan sikap ini secara konsisten, sejak beberapa bulan sebelum saya datang menjabat pos ini Maret lalu.⁴⁶

74. Ini merupakan keputusan yang amat menentukan. Keputusan ini bertolak belakang dengan komitmen publik Pemerintah Soeharto untuk menghargai keinginan bebas rakyat Timor. Keputusan itu juga menempatkan Indonesia pada jalur yang akan bertabrakan dengan dua partai utama Timor-Leste, yaitu UDT dan Fretilin, yang menyuarakan kemerdekaan, dan memberi sebuah tantangan diplomatik yang besar bagi komunitas internasional.

75. Pelaksanaan tujuan ini dipercayakan kepada badan intelijen militer Opsus (Operasi Khusus) yang menyusun proyek terselubung Timor, untuk melancarkan operasi yang diberi nama sandi Operasi Komodo. Operasi ini dikendalikan oleh Mayor Jenderal Ali Moertopo, kepala Opsus; dan Letnan Jenderal Yoga Sugama, kepala Bakin (Badan Koordinasi Intelijen). Eksekutif utamanya adalah Liem Bian Kie (sekretaris pribadi Ali Moertopo) dan penasihat utamanya adalah Harry Tjan dari CSIS (Centre for Strategic and International Studies), lembaga penggagas bagi Opsus. Ini bukanlah tantangan baru. Opsus, di bawah Ali Moertopo, pernah menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat pada 1969 dan berhasil memastikan bahwa proses itu membuahakan pilihan prointegrasi. Beberapa tokoh lainnya dalam kampanye integrasi Timor juga sudah berpengalaman dalam pengambilalihan Irian Barat. Tokoh-tokoh ini termasuk Presiden Soeharto, dahulunya Mayor Jenderal, yang mengomandoi kampanye militer Mandala 1962 untuk membebaskan Irian Barat dari kekuasaan Belanda; Jenderal Benny Moerdani; dan Kolonel Dading Kalbuadi.^{*} Seiring perkembangannya, Operasi Komodo mengembangkan sejumlah fungsi, termasuk diplomasi internasional (sebagian besar diarahkan kepada Portugal), intelijen, subversi, dan belakangan persiapan untuk penggunaan kekuatan militer. (Lihat Bagian 3: Sejarah Konflik.)

76. Di akhir Agustus 1975, Indonesia memperkeras posisinya dan memutuskan melancarkan intervensi militer guna mendapatkan integrasi. Hal ini terjadi setelah keberhasilan Fretilin dalam perang saudara, dan sinyal samar-samar oleh Menteri Koordinasi Antar-Wilayah Portugis, António de Almeida Santos, bahwa Portugal mungkin akan menyerahkan kekuasaan kepada Fretilin. Pada pertemuan 5 September, Presiden Soeharto dan Jenderal Benny Moerdani menyelidiki tujuh kemungkinan, mulai dari undangan kepada Indonesia dari Portugal untuk langsung turuntangan, sampai pada keterlibatan PBB, di mana Indonesia akan berpartisipasi. Presiden Soeharto mencoret semua opsi kecuali rencana Opsus yang ia sebut sebagai 'cara klasik'. Di bawah komando Jenderal Moerdani, rencana Opsus akan

* Catatan mengenai keterlibatan Kapten Moerdani di Irian Barat dan Timor-Leste dapat ditemukan dalam Julius Pour, Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan, Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman, Jakarta, 1993. Moerdani tanggung jawab atas peran militer dalam Operasi Komodo. Kalbuadi bertugas sebagai komandan lapangan dalam penyerangan Indonesia di Timor Portugis pada 16 Oktober 1975.

mengerahkan “sukarelawan” yang dipersenjatai dengan baik, untuk menyokong pasukan UDT dan pasukan Timor anti-Fretilin lain, dalam usahanya untuk mencegah penguasaan Timor sepenuhnya oleh Fretilin.⁴⁷

77. Tapi, Indonesia menjelaskan intervensi militernya kepada PBB dari segi kewajibannya untuk menjunjung tinggi hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. Dalam pernyataan kepada Dewan Keamanan pada 15 Desember 1975, perwakilan Indonesia, Anwar Sani, menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki klaim atas wilayah itu, bahwa Timor berada dalam keadaan anarki, dan bahwa Indonesia turuntangan atas permintaan partai-partai politik yang mewakili sebagian besar rakyat “untuk mengembalikan situasi damai kepada wilayah itu agar rakyat dapat menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri dengan bebas dan secara demokratis.”⁴⁸

78. Sidang Umum dan Dewan Keamanan menolak penjelasan Indonesia. Kedua badan itu mengecam campurtangan militer Indonesia dan menyerukan mundur secepatnya, serta mengimbau Portugal sebagai kekuasaan pemerintahan untuk bekerjasama dengan PBB “agar memungkinkan rakyat Timor-Leste menjalankan hak penentuan nasib sendiri mereka dengan bebas”. Dewan Keamanan juga meminta agar PBB mengirim utusannya ke wilayah tersebut, antara lain untuk menjalin “komunikasi dengan semua pihak di wilayah itu, dan agar semua Negara yang berkepentingan menjamin implementasi resolusi yang ada saat ini”.⁴⁹ Sekretaris Jenderal menunjuk Vittorio Winspeare Guicciardi untuk menjalankan tugas ini.

79. Tanggapan awal Indonesia terhadap resolusi PBB ini menyatakan, antara lain, bahwa Portugal telah kehilangan haknya untuk melaksanakan program dekolonisasi di wilayah itu, dan bahwa tidak perlu lagi ada referendum karena penentuan nasib sendiri telah terjadi dalam bentuk deklarasi integrasi dengan Indonesia pada 30 November. Posisi ini, yang jelas bertentangan dengan resolusi PBB dan komitmen Indonesia sendiri, kemudian ditinggalkan sebagai tanggapan terhadap adanya misi Guicciardi. Pemerintahan Sementara Timor Timur, yang dibentuk oleh Indonesia, berkata kepada utusan PBB bahwa “untuk menghormati kehendak PBB, yang pertama-tama harus dilakukan oleh Majelis Rakyat Timor Timur adalah meratifikasi keputusan rakyat untuk integrasi penuh dengan Republik (Indonesia)” dan bahwa perwakilan PBB akan diundang untuk mengamati proses itu.⁵⁰

80. Sebuah program empat tahap disusun oleh Indonesia dengan harapan bahwa sebuah proses yang kredibel akan memberi legitimasi bagi integrasi di mata dunia internasional, dan mencoret persoalan Timor-Leste dari agenda PBB.

81. Langkah pertama dan terpenting adalah untuk melaksanakan tindakan penentuan nasib sendiri. Ini terwujud dalam bentuk Majelis Rakyat, yang berkumpul di Dili pada 31 Mei 1976, dan menghasilkan petisi dengan suara bulat, yaitu untuk berintegrasi dengan Indonesia. Hal ini diikuti dengan kunjungan misi pencarian fakta Pemerintah Indonesia untuk memeriksa apakah permintaan itu benar-benar mewakili kehendak rakyat. Menyusul laporan positif oleh misi ini, Parlemen Indonesia menyetujui rancangan undang-undang integrasi pada 15 Juli 1976. Langkah keempat dan yang

terakhir, rencana undang-undang integrasi disahkan sebagai undang-undang dan diumumkan oleh Presiden Soeharto pada 17 Juli 1976.

82. Dalam sambutannya ketika menerima petisi itu, pada 7 Juni 1976, Presiden Indonesia berusaha menjelaskan integrasi dari sisi budaya dan sejarah, ketimbang sisi hukum, dan sebagai kemenangan atas kolonialisme Eropa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Indonesia. Dalam sambutannya yang ditujukan lebih kepada delegasi orang Timor daripada kepada komunitas internasional, ia mengatakan bahwa petisi tersebut merupakan “peristiwa bersejarah”, karena menandai penyatuan kembali setelah perpisahan selama generasi ke generasi oleh batas-batas buatan:

Saya tidak merasa seperti menyambut orang asing hari ini. Saya merasa bahwa saya kembali bertemu dengan saudara-saudara saya, yang sudah dipisahkan selama...ratusan tahun oleh batas-batas buatan pemerintah penjajahan.⁵¹

83. Proses integrasi memungkinkan Indonesia mengklaim bahwa rakyat Timor-Leste telah mengungkapkan keinginan mereka sekali dan untuk selamanya, dan bahwa wilayah itu telah menjadi provinsi Indonesia, secara sah dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Mulai saat itu, seruan-seruan Portugal dan yang lainnya untuk penentuan nasib sendiri ditolak sebagai campurtangan dalam urusan dalam negeri Indonesia. Hal ini juga menjadi dasar bagi penentangan Indonesia terhadap keterlibatan langsung para pemimpin Timor-Leste dalam negosiasi.

84. Komunitas internasional tidak mengakui proses pada 1976 ini. Walaupun ketika itu tidak banyak yang dikatakan oleh setiap negara, secara umum disepakati bahwa Majelis tersebut gagal memenuhi uji dasar kebebasan memilih, terutama karena kehadiran pasukan Indonesia, ketiadaan opsi lain, serta status meragukan keterwakilan para peserta. Resolusi Sidang Umum 31/53, yang disetujui pada 1 Desember 1976, menolak “klaim bahwa Timor-Leste telah disatukan dengan Indonesia, karena rakyat Wilayah itu belum bisa dengan bebas menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri mereka dan kemerdekaan”.⁵² Majelis Rakyat tidak mengikuti prosedur yang dipaparkan dalam resolusi Sidang Umum 1541 (XV) PBB tanggal 15 Desember 1960, yang menegaskan bahwa proses itu harus diinformasikan, bebas, dan demokratis. Seorang penasihat hukum Pemerintah AS, George H. Aldrich, mengatakan kepada Kongres:

Kita sebenarnya tidak tahu banyak mengenai proses seleksi bagi para utusan ini, walaupun prosesnya sendiri terjadi pada masa pendudukan militer oleh Indonesia ketika masih banyak pertempuran berlangsung.⁵³

85. Alison Stokes, yang mewakili Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta pada peristiwa itu, melaporkan bahwa para pengamat asing diperkenankan berada di Dili kurang daripada dua jam, dan sesi itu sendiri berlangsung selama satu jam. Dia menulis:

Penilaian saya adalah bahwa Majelis Rakyat Timor Timur, dengan serius, sungguh-sungguh, dan formal, dan dengan suara bulat mendukung integrasi dengan Indonesia. Namun, bagi pengamat luar, ada dua kecacatan berat dalam tindakan penentuan nasib sendiri ini. (A) Siapa-siapa saja para wakil yang mengambil keputusan ini, bagaimana mereka dipilih, dan apakah mereka memang dapat mewakili kehendak rakyat Timor-Leste. (B) Hanya ada satu opsi yang dicantumkan untuk status politik masa depan, yakni integrasi. Saya diberitahu di Dili, pemilihan distrik dilakukan atas dasar satu orang satu suara; dan seorang wartawan memberi tahu saya bahwa di Baucau pun demikian. Di daerah-daerah lain ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan adat setempat, di mana para tetua adat yang melakukan seleksinya.

Ketika saya menanyakan kepada orang Indonesia yang bersama kami mengapa Majelis Rakyat membahas hanya satu opsi, yakni integrasi, mereka mengatakan bahwa pilihan tersebut harus dipandang dalam konteks keseluruhan dari berbagai kejadian dalam bulan-bulan terakhir, yakni ketika opsi-opsi lain seperti hubungan dengan Portugal atau kemerdekaan, telah dibuang oleh orang Timor Timur. Selain itu, ada beberapa aspek yang mengecewakan hari itu: (A) Ketika di pesawat, kami diberikan selebaran bertajuk 'Timor Timur', yang diterbitkan oleh PSTT yang antara lain menyatakan, bahwa 'rakyat Timor Timur sepenuhnya berada di belakang Pemerintahan Sementara dalam mempersiapkan integrasi penuh Timor Timur ke dalam Republik Indonesia...': penilaian dini itu terasa janggal. (B) Sidang Majelis tersebut dilakukan dalam bahasa Portugis, dan hanya sebagian yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Seorang Timor yang duduk di dekat saya mengomentari dalam bahasa Inggris jalannya sidang tersebut atas permintaan saya, namun ini tidak sebaik penerjemahan resmi. (C) Kami tidak menemui satu pun anggota PSTT atau Majelis Rakyat. Tidak ada konferensi pers. (D) Pawai di jalanan dan sorak-sorai massa terlalu diatur dan terlihat tidak spontan.⁵⁴

Hanya sedikit wakil komunitas internasional yang hadir. Indonesia mengungkapkan penyesalan bahwa undangan untuk Sekretaris Jenderal, Dewan Keamanan serta Komite Khusus Dekolonisasi tidak diterima, dan bahwa hanya tujuh negara anggota PBB yang mengirimkan pengamat-pengamatnya.* Di antara mereka yang diundang namun tidak menerima adalah Australia, Jepang, Filipina, Singapura, dan AS. Fretilin mengecam Majelis itu sebagai tidak representatif, dan menyatakan bahwa merekalah yang mewakili mayoritas rakyat itu.⁵⁵

* Tujuh negara yang mewakili adalah: India, Iran, Malaysia, Selandia Baru, Nigeria, Arab Saudi, dan Thailand. Laporan Sekretariat PBB, Annex 1. A/AC.109/L.1098 dan Add. 1.

86. Walaupun proses itu tidak sah, lebih daripada 30 negara anggota PBB secara eksplisit atau implisit mengakui Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia sampai 1990, dan pada saat yang sama juga mengakui bahwa Timor-Leste belum menjalankan tindakan penentuan nasib sendiri yang sungguh-sungguh. Beberapa negara seperti Australia, India, Papua Nugini, dan Amerika Serikat mengakui penggabungan itu melalui pernyataan publik eksplisit. Hanya Australia yang secara eksplisit mengungkapkan dukungannya bagi pengakuan *de jure*, praktik yang kemudian ditinggalkan pada tahun 1990-an. Yang lainnya memastikan pengakuan mereka dengan suara yang mereka berikan di Sidang Umum PBB. Negara-negara ini termasuk Bangladesh, Kanada, Yordania, Malaysia, Oman, Filipina, Singapura, Swedia, dan Thailand. Kelompok-negara yang ketiga dapat dikatakan secara efektif telah memberi pengakuan, dan dalam beberapa kasus menegaskan kembali dukungan yang sudah ada, dengan menandatangani perjanjian-perjanjian dengan Indonesia setelah 1976, yang tidak mengeluarkan Timor-Leste dari definisi 'Indonesia'. Negara-negara ini adalah Austria, Brunei, Bulgaria, Cina, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Hungaria, Italia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Norwegia, Pakistan, Arab Saudi, Swedia, Swiss, dan Uni Emirat Arab.*

87. Francesc Vendrell, yang telah bekerja dalam masalah Timor-Leste di Sekretariat PBB, menjelaskan kepada Komisi bagaimana Indonesia bisa memperoleh berbagai macam dukungan internasional seperti ini, walaupun telah melakukan pelanggaran di Timor [Leste]. Dia mengatakan kepada Komisi pada audiensi publik mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional:

Walaupun reaksi langsung di sebagian besar negara adalah mengutuk aneksasi Timor-Leste, sedikit demi sedikit, dan cukup cepat, dalam beberapa tahun sebagian besar negara tidak lagi ingin terlalu kritis mengenai apa yang terjadi di Timor-Leste.⁵⁶

88. Vendrell menjelaskan bahwa hubungan-hubungan politik dan ekonomi Indonesia dengan sejumlah kelompok penting memengaruhi pergeseran sikap yang pragmatis ini. Di bawah Presiden Soeharto, Indonesia mendapat dukungan di Barat sebagai "sebuah negara antikomunis". Indonesia juga mendapat dukungan dalam ASEAN dan dunia Islam, yang dalam keduanya Indonesia merupakan anggota terbesar, dan dalam gerakan nonblok yang turut didirikan oleh Indonesia.⁵⁷

89. Pemerintah Indonesia terus berusaha mempertahankan keabsahan proses 1976 itu, walau menghadapi tantangan internasional yang semakin kuat terhadap kehadirannya di Timor, khususnya setelah pembantaian Santa Cruz. Pada 1992, Menteri Luar Negeri Ali Alatas merasa terpanggil untuk membawa posisi Indonesia ke National Press Club di Washington. Dalam pidatonya yang bertajuk "Debunking the Myths around a Process of Decolonisation" ("Membantah Mitos Seputar Suatu Proses Dekolonisasi"), dia kembali menyatakan posisi yang sudah sering

* Daftar negara yang menandatangani perjanjian mengenai perpajakan dan perjanjian lainnya dengan Indonesia yang dapat dianggap sebagai pengakuan integrasi dapat dilihat di Krieger, hal. 291-297.

dikemukakan, bahwa Indonesia tidak memiliki klaim teritorial atas wilayah Timor-Leste dan telah mengikuti keputusan rakyat Timor-Leste mengenai masa depannya, yang dilakukan melalui proses yang benar dan adil.⁵⁸

90. Pada 21 Mei 1998, BJ Habibie menjadi Presiden Indonesia yang ketiga. Agenda perubahan daruratnya juga mencakup pembahasan masalah Timor-Leste yang oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas sudah diakui secara terbuka sebagai “kerikil di dalam sepatu Indonesia”, suatu penghalang bagi pembangunan. Presiden dilaporkan pernah berkata kepada rekan-rekannya:

Kenapa kita masih ada masalah ini ketika kita punya segudang masalah lain? Apa kita dapat minyak? Tidak. Apa kita dapat emas? Tidak. Kita cuma dapat batu-batu. Kalau orang Timor Timur masih tidak berterima kasih setelah segala apa yang sudah kita lakukan, untuk apa kita harus bertahan?⁵⁹

91. Pada Juni ia mengumumkan bahwa Indonesia akan mempertimbangkan sebuah ‘status khusus’ bagi Timor-Leste, suatu perubahan kebijakan yang sebelumnya berulang-kali ditolak oleh Presiden Soeharto, termasuk yang terakhir pada 1997. Pada 27 Januari 1999, khawatir bahwa otonomi akan berujung pada kemerdekaan yang akan merugikan Indonesia dari segi biaya, Presiden Habibie mendapat persetujuan Kabinet untuk sebuah resolusi yang singkat dan jelas mengenai persoalan ini, melalui pilihan antara otonomi dan kemerdekaan. Setelah pertemuan Kabinet, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengumumkan bahwa:

Otonomi khusus akan diberikan kepada Timor Timur. Dan apabila ini tidak diterima luas di Timor Timur, kita akan meminta keanggotaan baru MPR hasil pemilihan umum mendatang ini, untuk melepaskan Timor Timur dari Indonesia.’

92. Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor dengan bebas menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan PBB, yang pertama kalinya dijanjikan pada 1960. Militer Indonesia melanjutkan kebijakan subversi yang telah menjadi ciri pendekatan mereka sejak 1974. Tapi, upaya-upaya sabotase dan intimidasi mereka diimbangi oleh kekuatan demokrasi dalam pemerintahan dan kalangan sipil Indonesia. Hasilnya sangat jelas: 21,5% berpihak pada otonomi khusus, dan 78,5% menentang.

93. Dalam pernyataannya mengumumkan hasil Jajak Pendapat, Sekretaris Jenderal Kofi Annan menasihati:

.....
* Dikutip dalam *East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge*, Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra, 2001 [selanjutnya, *East Timor in Transition*, DFAT], hal. 38. Sejumlah orang penting Indonesia telah meminta perubahan kebijakan ini selama beberapa tahun (lihat bagian mengenai masyarakat sipil Indonesia dalam bab ini). Setelah Habibie menjabat sebagai presiden, tokoh-tokoh seperti Adi Sasono, Dewi Fortuna Anwar, dan Ginanjar Kartasasmita juga memengaruhi pemikirannya. Lihat Clinton Fernandes, *Reluctant Saviour*, Scribe Publications, Carlton North, Victoria, 2004, hal.40-41. Sebuah rekomendasi yang berpihak kepada penentuan nasib sendiri dari Perdana Menteri Australia John Howard, juga merupakan faktor penting.

Mereka yang memilih untuk menerima usulan otonomi khusus ini sebaiknya tidak menganggap hasil ini sebagai suatu kekalahan. Dan yang mayoritas sebaiknya tidak menganggap ini sebagai suatu kemenangan: tidak ada yang menang dan yang kalah hari ini. Sebaliknya, momen ini mengumandangkan kesempatan baru bagi warga Timor-Leste untuk mulai menempa masa depan baru bagi apa yang sebentar lagi akan menjadi Timor-Leste merdeka.⁶⁰

Kesimpulan

94. Pemerintahan Soeharto melanggar hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri. Dilanggar pula hukum internasional dan semangat UUD 1945, yakni budaya dan kebijakan anticolonial. Pihak militer Indonesia paling tanggung jawab atas pelanggaran ini. Rakyat Indonesia tidak dimintai pendapat atau diberi informasi sehingga tidak memikul tanggungjawab atas pelanggaran tersebut.

95. Pemerintahan Soeharto memiliki kepentingan yang sah terhadap hasil proses dekolonisasi Timor, dan disediakan pula jalur-jalur komunikasi untuk menyalurkan kepentingan tersebut, tetapi Indonesia memilih mengabaikan proses yang sah.

96. Pelanggaran ini terjadi menyusul keputusan rahasia tingkat tinggi pada 1974 untuk mengintegrasikan koloni Portugis saat itu ke dalam wilayah Indonesia. Secara terbuka pemerintahan Soeharto mendukung hak rakyat Timor untuk memilih secara bebas salah satu dari tiga pilihan yang ada, sebagaimana diatur dalam Resolusi 1541(XV) tahun 1960 Sidang Umum PBB, dan menyatakan diri sebagai warga negara internasional yang baik. Dalam praktiknya, Indonesia berusaha mengatur hanya satu dari ketiga pilihan tersebut, yaitu integrasi, serta melemahkan dan menolak hak atas kemerdekaan yang merupakan tujuan akhir kedua partai politik utama Timor. Pemerintahan Soeharto berusaha mengesahkan pengambilalihan wilayah yang dilakukannya atas dasar tanggungjawab kemanusiaan, keamanan regional, pertahanan, kultur prakolonial, ikatan historis dan etnis, serta kurangnya kelangsungan hidup ekonomi Timor-Leste. Pengakuan ini bukanlah alasan yang sah untuk menolak hak tak terhapuskan rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, dan tidak sesuai dengan Deklarasi 1960 tentang 'Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Bangsa Kolonial' yang dikatakan dijunjung tinggi oleh Indonesia.

97. Proses subversi ini semakin agresif. Presiden Soeharto menegaskan kepada para penasihatnya dan pemerintahan-pemerintahan asing bahwa ia lebih suka mencapai integrasi melalui proses politik, tapi ia tidak menyatakan kekuatan militer tidak mungkin digunakan. Ia mengizinkan penggunaan kekuatan militer pada 1975 ketika menjadi jelas bahwa perkembangan di Timor lebih berpihak pada kemerdekaan. Meskipun pihak-pihak yang berpengaruh dalam komunitas internasional mengakomodasi keputusan ini, PBB mengutuk intervensi Indonesia dan menolak keabsahan aneksasi sesudahnya. PBB tetap menjunjung tinggi hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, meskipun klaim Indonesia resmi justru sebaliknya.

98. Intervensi militer dan kesalahan manajemen pemerintahan Soeharto di Timor-Leste menjadi bencana bagi rakyat Timor-Leste dan Indonesia sendiri, termasuk ribuan tentara muda Indonesia dan keluarga mereka. Kekerasan yang berkelanjutan pada tingkat lokal menyebabkan kegagalan diplomasi pada tingkat internasional. Hal ini mengakibatkan hasil yang berusaha dihindari oleh Indonesia dan negara-negara tetangganya pada 1975, yaitu Timor-Leste merdeka di bawah pimpinan Fretilin.

99. Keputusan Presiden Habibie pada 1999 untuk membebaskan Indonesia dari Timor-Leste melalui tindakan penentuan nasib sendiri yang diawasi oleh PBB, dan penghormatan atas proses tersebut oleh Presiden Abdurrahman Wahid, adalah tindakan negarawan sejati yang sesuai dengan hukum internasional dan membantu memulihkan kedudukan Indonesia dalam komunitas internasional.

Australia

100. Meskipun Australia bukanlah pihak yang berkepentingan utama dalam konflik Timor-Leste, pemerintahan Australia berturut-turut mengamati secara dekat isu ini, dan Australia dilihat sebagai pemain utama oleh Portugal dan Indonesia, serta juga oleh Resistansi Timor-Leste. Kedekatan Australia dengan Pulau Timor dan statusnya sebagai kekuatan menengah di wilayah ini, ditambah dengan keberadaan masyarakat sipil yang aktif serta perhatian parlemen dan media atas situasi Timor Timur, membuat keterlibatan Australia tidak terelakkan, meskipun pemerintah Australia dalam berbagai kesempatan berusaha menjauhkan diri dari isu tersebut.

101. Kekuatan Barat utama juga berharap Australia memainkan peran penting. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Inggris menekan Australia agar meningkatkan tanggungjawabnya terhadap isu-isu regional, antara lain isu Timor Portugis, setelah isu tersebut menjadi masalah internasional pada 1960. Sidang-sidang kabinet 1963 tentang masa depan wilayah ini menyebutkan “usulan-usulan oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa Australia sebaiknya meningkatkan inisiatif pertahanan dan diplomasi di Asia Tenggara, serta membagi tanggungjawab langsung dengan Amerika Serikat atau Inggris, ketimbang sekadar mendukung kepemimpinannya.”⁶¹

102. Setelah keputusan Portugal untuk mendekolonisasi wilayah ini pada 1974, pemerintah negara-negara Barat meminta kepada pemerintah Australia saran intelijen dan kebijakan tentang isu ini. Menyadari pengaruh tetangganya di Eropa, pemerintahan Soeharto memberikan perhatian khusus pada hubungannya dengan Australia, dan tetap menginformasikan para pejabat Australia tentang perkembangan posisi Indonesia.⁶² Di antaranya, pembicaraan tentang isu Timor-

* Sebagai tambahan atas komunikasi resmi dengan Bakin (Badan Koordinasi Intelijen) dan Departemen Luar Negeri Indonesia, Australia memiliki hubungan khusus melalui Harry Tjan mengenai cara-cara kerja Operasi Komodo. Komunikasi dari pejabat kedutaan besar pada Juli 1975 menggambarkan betapa Australia menghargai keterbukaan Tjan dan koneksinya: “Ia sering membacakan langsung untuk kita catatan pertemuan rahasia dengan Portugal mengenai Timor Portugis. Ia memiliki dokumen-dokumen rahasia mengenai hal itu. Sering ia menerima telepon dari orang-orang penting (Ali, Yoga) ketika kami berada di kantornya Tjan menghormati dan memercayai kami. Ia berbicara kepada kami tak seperti ia bicara kepada orang lain.” Dokumen 157, Jakarta, 21 Juli 1975, dalam Wendy Way (ed.), *Australia and*

Leste antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, dalam dua kesempatan pada 1974 dan 1975. Pentingnya peran Australia, baik bagi pemerintahan Indonesia maupun pemerintahan negara-negara Barat, ditunjukkan secara jelas melalui dampak keputusan Australia untuk menentang Indonesia mengenai pertanyaan yang diajukan dalam Sidang Umum PBB pada Desember 1975. Pada waktu itu Harry Tjan, penasihat penting Presiden Soeharto untuk isu Timor, dengan marah memberitahu pemerintah Australia bahwa suara Australia merugikan karena banyak negara mengharapkan kepemimpinan Australia. Amerika, dikatakannya, telah menyampaikan kepada pihak Indonesia bahwa niat Australia dalam pemungutan suara sangat memengaruhi pemberian suara pihak Amerika. Indonesia juga mengetahui bahwa Kelompok Sembilan (termasuk Inggris) juga dipengaruhi oleh sikap Australia. Tentu saja beberapa negara lain terpengaruh juga. Pendekatan umum Australia di PBB “sangat merugikan Indonesia”.⁶²

Kebijakan Australia hingga 1974

103. Ciri-ciri utama kebijakan Australia mengenai isu tersebut berkembang pada 1960-an setelah Timor Portugis dicantumkan oleh PBB sebagai wilayah tidak berpemerintahan sendiri. Kebijakan ini bukan timbul sebagai tanggapan atas hak Timor yang baru saja diakui, tapi sebagai kewaspadaan mengenai posisi bertentangan antara Portugal dan Indonesia, yang potensial menimbulkan konflik di utara Australia. Para pembuat kebijakan di Canberra percaya bahwa penolakan Salazar untuk bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membuat konsesi minimal terhadap sentimen Dunia Ketiga akan memancing Sukarno untuk mengambil tindakan militer terhadap Portugal yang serupa dengan tanggapannya terhadap Inggris atas pembentukan Malaysia dan terhadap Belanda mengenai Irian Barat. Antara 1961 dan 1964, Perdana Menteri Australia, RG Menzies, beberapa kali menulis surat kepada Perdana Menteri Portugis, António de Oliveira Salazar, dalam rangka menghindari krisis yang diprediksikan.

104. Konflik tidak terjadi, tetapi sebagai tanggapan atas kemungkinan itu, dikembangkan beberapa kebijakan kunci. Beberapa bentuk kebijakan, yang diambil sebelum kemunculan pemerintahan Soeharto atau pembentukan Fretilin, mencirikan penanganan isu Timor-Leste oleh Australia sepanjang masa konflik.

105. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh Menteri Luar Negeri Garfield Barwick mencantumkan hal-hal berikut.⁶³

- Australia mendukung prinsip penentuan nasib sendiri.*

the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor 1974-1976, Department of Foreign Affairs and Trade [selanjutnya, DFAT], Melbourne University Press, Victoria, 2000, hal. 295.

* Cara mengimplementasi tindakan penentuan nasib sendiri merupakan pokok bahasan dalam lingkungan resmi. Sebuah kelompok kerja departemen melaporkan: “Tentu saja pemerintah ingin melihat penyerahan oleh Portugal diiringi dengan semacam proses penentuan nasib sendiri. Di samping itu, kami harapkan bahwa pihak Indonesia sendiri menginginkan adanya semacam tindakan penentuan nasib sendiri untuk melindungi diri dari tuntutan neo-kolonialisme karena membuat persetujuan dengan kekuasaan kolonial. Mungkin secara teoretis masalah penentuan nasib sendiri bisa diatasi dengan pengaturan seperti di Nugini Barat” “The Future of Portuguese Timor”, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal.31

- Timor tidak memiliki masa depan di bawah pemerintahan Portugal.
- Wilayah ini tidak memiliki kemampuan untuk kemerdekaan politik.
- Australia akan menerima penggabungan dengan Indonesia, apabila penggabungan tersebut berjalan damai dan seiring dengan keinginan rakyat Timor yang diungkapkan secara bebas.
- Australia akan menentang agresi militer Indonesia dalam wilayah ini, dan mendukung tindakan PBB sebagai balasannya.
- Opini publik Australia tidak akan menerima tindakan kekerasan Indonesia terhadap Timor.
- Inisiatif Australia apapun mengenai persoalan ini harus mempertimbangkan pentingnya hubungan baik Australia dan Indonesia. Catatan-catatan Sidang Kabinet 1963 mengenai hal tersebut di atas menyatakan:

Kabinet menunjukkan bahwa (tidak ingin) mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan Australia dipandang oleh Indonesia dan negara-negara lain sebagai musuh. Tujuan Australia terhadap Indonesia adalah mencapai tingkat saling pengertian yang setinggi mungkin.⁶⁴

106. Barwick menolak proposal yang diajukan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Harriman, yang menyatakan agar Portugal dibantu untuk membentuk program pembangunan sepuluh tahun, yang akan memuncak pada tindakan penentuan nasib sendiri rakyat Timor.

107. Nasib Timor Portugis tidak dipersoalkan pada tahun-tahun awal Orde Baru. Pemerintahan Soeharto menunjukkan sedikit ketertarikan pada wilayah ini, dan Australia menutup konsulatnya di Dili pada 1971. Australia menyambut baik Orde Baru dan sangat menghargai penekanan Orde Baru pada stabilitas, antikomunisme, pertumbuhan ekonomi, masalah domestik, dan hubungan regional positif yang, dalam pandangan Australia, sangat berbeda dengan kebijakan luar negeri yang agresif dan pergolakan domestik di bawah pemerintahan Sukarno. Perkuatan dan perluasan hubungan antara Australia dan Indonesia menjadi tujuan utama. Pada 1973, Kedutaan Besar Australia melaporkan:

Presiden Soeharto (...) bermaksud baik terhadap Australia... Hal ini merupakan kesempatan yang unik bagi Australia, dengan mengutamakan kepentingan nasional, untuk mengembangkan hubungan lebih erat dengan negara yang sangat penting bagi Australia.⁶⁵

108. Selama periode ini, pejabat-pejabat Australia terus memberikan saran mendukung penggabungan Timor ke Indonesia. Pada 1970, Perdana Menteri Australia, William McMahon, mendapat informasi:

Tidak ada gejala bahwa Indonesia ingin mengambalalih Timor Portugis... (tapi) dalam jangka panjang penggabungan koloni itu ke dalam Indonesia merupakan opsi yang paling layak.⁶⁶

109. Pada 1973 Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, mendapat informasi:

Rakyat Timor Portugis secara marginal mungkin akan lebih baik di bawah pemerintahan Indonesia, daripada pemerintahan yang lain (separuh pulau ini, yang ada di bawah Indonesia, diatur dengan lebih baik daripada koloni Portugis ini, dan prospek koloni ini sebagai entitas terpisah sangat buruk).⁶⁷

Kebijakan Australia 1974 - 1975

110. Kebijakan Australia tentang Timor setelah Revolusi Anyelir di Portugal terutama diputuskan oleh Perdana Menteri Australia Gough Whitlam (1972 - 1975). Pemerintahan Partai Buruh, yang pertama setelah lebih daripada dua dasawarsa, di bawah Whitlam memperkenalkan serangkaian reformasi domestik yang penting, selain juga memberikan perhatian terpenting atas posisi Australia di Asia dan hubungannya dengan Indonesia.

111. Kebijakan Whitlam tentang Timor mirip kebijakan yang diwariskan pemerintahan Menzies, dengan satu perbedaan penting. Kebijakan Whitlam menempatkan prioritas tertinggi pada kerjasama dengan Indonesia, khususnya dengan Presiden Soeharto sendiri, yang kedudukannya sebagai pengganti Sukarno dan sikap positifnya terhadap Australia merupakan faktor-faktor baru yang disambut baik. Whitlam mengambil kebijakan ini tanpa berbicara dengan Kabinet.⁶⁸ Namun, garis besar kebijakan disetujui oleh para pemimpin dari kedua kubu politik. Sekretaris Departemen Luar Negeri, Alan Renouf, memberitahu para pejabat Malaysia pada Oktober 1975:

Perdana Menteri [Whitlam], sebagian besar anggota Kabinet, serta Fraser [Pemimpin Partai Oposisi] dan Peacock [Menteri Luar Negeri Bayangan], sependapat dengan aspirasi kaum integrasionis Indonesia.⁶⁹

112. Whitlam membicarakan kebijakan Timor secara langsung dengan Presiden Soeharto dalam dua kesempatan: pada 5 - 8 September 1974 di Yogyakarta, Indonesia, dan pada April 1975 di Townsville, Australia. Presiden Soeharto menegaskan bahwa ia memberikan status khusus pada pertemuan pertama dan berharap mendengar pernyataan resmi tentang Timor dari Perdana Menteri Australia.

113. Singkatnya, Whitlam mengajukan tiga hal utama kepada presiden Indonesia:

1. Ia mengurangi ketiga pilihan yang ada bagi rakyat Timor menurut hukum internasional menjadi satu pilihan, yakni bergabung dengan Indonesia, apabila pilihan ini secara bebas dipilih oleh rakyat Timor. Menurut catatan resmi pertemuan tersebut:

Perdana Menteri menyatakan dua hal sebagai dasar pemikirannya mengenai Timor Portugis. Pertama, ia yakin bahwa Timor Portugis seharusnya menjadi bagian dari Indonesia.

Kedua, hal ini harus terjadi sejalan dengan harapan-harapan rakyat Timor Portugis yang diungkapkan dengan tepat.

2. Kemerdekaan bukanlah pilihan. Ia memberitahu Presiden:

Timor Portugis terlalu kecil untuk menjadi merdeka. Timor Portugis tidak mampu secara ekonomi. Kemerdekaan tidak akan disambut baik oleh Indonesia, Australia, dan negara-negara lain di wilayah ini, karena Timor Portugis yang merdeka pasti akan menjadi pusat perhatian negara-negara lain di luar wilayah ini.

Ia memberitahu presiden [Soeharto] bahwa Australia akan mendukung posisi Indonesia di Lisabon:

Tujuan kami sendiri di Lisabon adalah menunjukkan kepada pemerintahan Portugis pandangan mengenai Timor Portugis sebagai bagian dari Indonesia.

3. Ia menekankan pentingnya melindungi hubungan bilateral dan tidak mengasingkan opini publik Australia:

Ia berharap bahwa Presiden akan tetap mengingat kebutuhan akan dukungan dari publik Australia bagi bergabungnya Timor Portugis ke Indonesia, yang berdasar pada penghormatan atas harapan rakyat yang dinyatakan secara demokratis.⁷⁰

Ia menekankan poin ini pada pertemuan kedua dengan presiden pada hari yang sama.

114. Presiden Soeharto, pada intinya, mengutarakan posisi yang sama. Mayor Jenderal Ali Murtopo, kepala proyek rahasia Opsus untuk Timor, memberitahu Duta Besar Australia untuk Portugal pada 14 Oktober bahwa pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk integrasi:

Ali berkata bahwa sampai kunjungan Whitlam ke Jakarta, mereka belum mengambil keputusan tentang Timor. Namun dukungan Perdana Menteri untuk gagasan penggabungan ke Indonesia menolong mengkristalkan pemikiran mereka, dan kini mereka yakin akan kebijaksanaan posisi ini.⁷¹

115. Pembuatan kebijakan Whitlam membalikkan prioritas yang ditetapkan dalam pertemuan (briefing) mengenai penentuan nasib sendiri, yang telah disetujui oleh Menteri Luar Negeri, Senator Willesee, sebelum pertemuan Whitlam dengan Soeharto. Hal tersebut menekankan pada proses penentuan nasib sendiri yang terbuka bagi ketiga pilihan yang ada, ketimbang pada hasil proses tersebut. Ini juga tidak menyingkirkan isu kemerdekaan atas dasar-dasar ekonomi.⁷² Menteri Luar Negeri dan sekretaris departemennya, Alan Renouf,

sependapat dengan Whitlam bahwa integrasi sepenuhnya dengan Indonesia adalah hasil terbaik, tetapi ia percaya pula bahwa prioritas harus diletakkan pada penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Dalam pandangan mereka, hal ini akan lebih bisa diterima bagi publik Australia dan memastikan bahwa hal-hal yang tidak dapat diterima dalam Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat tidak terulang di Timor. Pada November 1991, Willesee mengutarakan ketidaksepakatan dirinya dengan Whitlam:

Saya percaya seharusnya kita tidak bersikap seperti Tuhan, tetapi biarlah rakyat Timor yang memutuskan.*

116. Whitlam mengulangi posisinya pada pertemuan lebih lanjut dengan Presiden Soeharto di Townsville pada 4 April 1975. Sebagai tanggapan, Presiden Soeharto berkata bahwa ia menyadari adanya spekulasi di Australia tentang kemungkinan invasi Indonesia atas Timor Portugis, tetapi “Indonesia tidak akan pernah memikirkan tindakan semacam itu.”⁷³

117. Setelah pecah perang saudara pada Agustus, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Woolcott, menganjurkan agar Perdana Menteri tidak lagi menulis surat tentang Timor kepada Presiden Soeharto. Ia menulis:

Soeharto akan lebih mencari pengertian dari Australia terhadap apa yang ia, setelah berpikir baik-baik, putuskan untuk lakukan, ketimbang ingin menerima apa yang mungkin ia anggap sebagai ceramah ataupun peringatan bersahabat...Mulai sekarang saya mengusulkan agar kebijakan kita didasarkan pada menjauhkan diri kita sejauh mungkin dari isu Timor; segera menarik warga Australia dari Timor; membiarkan kejadian demi kejadian berjalan; serta jika dan ketika Indonesia melakukan intervensi, bertindak untuk meminimalkan dampak publik di Australia, dan secara privat menunjukkan pengertian kepada Indonesia atas isu-isu yang mereka hadapi.

118. Duta Besar Woolcott menyatakan bahwa masalah Celah Timor di perbatasan dengan laut Australia dapat lebih mudah diselesaikan dengan Indonesia, daripada dengan Portugal atau Timor-Leste merdeka, dan menyimpulkan:

Saya tahu bahwa yang saya rekomendasikan lebih cenderung pragmatis ketimbang berprinsip, tetapi inilah yang dimaksud dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri.⁷⁴

* David Jenkins, “Whitlam can’t maintain outrage over East Timor”, *The Sydney Morning Herald*, 30 November 1991. Whitlam dan Senator Willesee setuju mengenai perlunya mempersiapkan Timor untuk menentukan nasib sendiri. Pada Juli 1975, Menteri Luar Negeri menyetujui program hibah Australia bagi Timor-Leste, namun program tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terjadi perang saudara antara UDT dan Fretilin. (*Australian Senate Report, East Timor, Desember 2000*, hal. 140.)

119. Sejalan dengan saran ini, pada 26 Agustus 1975 Whitlam menyampaikan kepada Parlemen Australia bahwa Australia bukanlah pihak yang berkepentingan di Timor Portugis:

Kita tidak memiliki kewajiban maupun kepentingan nasional untuk terlibat kembali dengan perihal-perihal kolonial maupun pascakolonial Timor Portugis...Kita tetap berpendapat bahwa masa depan wilayah itu harus diselesaikan oleh Portugal dan rakyat Timor sendiri, dengan Indonesia yang juga berperan penting karena kepentingan utamanya.⁷⁵

120. Indonesia menyampaikan kepada Whitlam penghargaan atas bantuan dan pengertiannya:

Jenderal Moerdani mengatakan bahwa ia, Presiden, dan yang lain berutang besar kepada Whitlam atas pengertian yang sudah beliau tunjukkan mengenai posisi Indonesia dan posisi bermanfaat yang sudah beliau ambil. Presiden sangat menghargai ini. Tapi dia juga menghargai kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah. Apabila Australia tidak bisa mendukung Indonesia secara terbuka di beberapa bulan ke depan, dia berharap bahwa kita akan mengambil pilihan ketiga dan tetap diam.⁷⁶

121. Secara resmi Australia tidak menentang Operasi Flamboyan, serangan Indonesia ke Timor Portugis pada 16 Oktober 1975, yang mengakibatkan kematian lima wartawan yang berbasis di Australia. Sebelumnya Woolcott pernah mengeluarkan pernyataan dari Jakarta:

Meskipun kami mengetahui bahwa hal itu tidak benar, namun secara formal posisi pemerintah Indonesia adalah tidak ada intervensi militer Indonesia di Timor Timur. Apabila Menteri [Senator Willesee] menyampaikan atau menyiratkan kepada publik bahwa pemerintah Indonesia berbohong, kita akan mengundang reaksi terluka dan marah.⁷⁷

122. Pada 11 November 1975, Malcolm Fraser mengganti Whitlam sebagai perdana menteri, tetapi melanjutkan garis kebijakan yang sama.* Atas permintaan Fraser, Duta Besar Woolcott secara rahasia bertemu dengan Presiden Soeharto di kediamannya pada 25 November 1975 untuk meyakinkan bahwa pemimpin Australia saat ini meletakkan hubungan Australia dengan Indonesia, dan hubungan

* Malcolm Fraser ditunjuk sebagai pemegang jabatan Perdana Menteri setelah pemerintahan Whitlam dibubarkan pada 11 November 1975. Peranan sebagai pemerintah sementara secara inti adalah mempertahankan proses administrasi rutin tanpa menerapkan kebijakan baru. Fraser menjadi perdanamenteri setelah Partai Liberal memenangi pemilu 13 Desember 1975, dan tetap bertugas hingga 1983. Kebijakan pra-pemilunya mengenai Timor tetap dipertahankan.

pribadi dengan Presiden, sama tingginya dengan yang dilakukan Whitlam; bahwa pemimpin Australia kini akan “berusaha lebih meningkatkan hubungan tersebut” dan tidak akan menerima José Ramos-Horta atau wakil Fretilin manapun apabila mereka datang ke Australia.

123. Fraser juga meminta Duta Besar Woolcott untuk memberitahu Presiden “bahwa ia memahami kebutuhan Indonesia untuk memperoleh solusi yang tepat bagi isu Timor Portugis.” Woolcott melaporkan bahwa Presiden sangat senang ketika mengetahui pengertian Australia, dan ketika ia bertanya kepada Duta Besar Woolcott untuk memastikan maksud Perdana Menteri, Woolcott menjawab:

Saya memperkirakan bahwa apa yang dimaksudkan Perdana Menteri dengan solusi yang tepat adalah solusi yang sesuai dengan kepentingan kebijakan Indonesia.

124. Baik Perdana Menteri maupun Presiden sama-sama tidak langsung mengacu kepada penggunaan kekuatan militer.

Presiden tidak menyinggung keterlibatan Indonesia secara langsung meskipun saya beranggapan ia pasti menyadari bahwa saya mengetahui hal itu.*

125. Secara pribadi Whitlam berkampanye atas nama Indonesia. Setelah kunjungannya ke Timor Timur pada 1982, yang segera ia laporkan kepada Presiden Soeharto, ia berperan penting dalam pencopotan Dom Martinho da Costa Lopes sebagai kepala Gereja Katolik di Timor, dan kemudian pada tahun itu juga ia berbicara di hadapan Komite Khusus PBB mengenai dekolonisasi dan mengajukan petisi kepada komite ini untuk menghapus isu Timor-Leste dari agenda PBB.

126. Sepanjang tahun 1970-an Pemerintah Australia mengikuti kebijakan ‘bisnis seperti biasa’ dalam urusannya dengan Indonesia, termasuk kerjasama dalam bidang pertahanan. Pemerintahan Whitlam memulai kerjasama pertahanan dengan Indonesia pada Juli 1972 senilai 20 juta dollar Australia yang termasuk perlengkapan berupa 16 pesawat penyerang, kerjasama latihan dan intelijen. Kerjasama ini diperbarui pada 1975 dan meningkat pada pemerintahan Fraser. Bantuan ini disediakan dengan persyaratan bahwa bantuan tersebut tidak boleh digunakan di Timor-Leste ataupun untuk represi internal.

Kebijakan Australia 1975 - 1998

127. Kebijakan dua-arah Australia menciptakan dilema politik ketika isu Timor-Leste dibahas di Sidang Umum PBB menanggapi invasi Indonesia. Australia

.....
* Dokumen 343, Canberra, 20 November 1975 dan Dokumen 344, Jakarta, 25 November 1975, dalam Wendy Way, hal. 579-80. Fraser mengatakan kepada TV ABC pada 12 September 2000 bahwa Departemen Luar Negeri tidak memberitahu kepada dia sebagai pemegang jabatan perdana menteri mengenai rencana invasi Indonesia. (Alan Ramsey, “East Timor the secret that never was”, Sydney Morning Herald, 16 September 2000.)

memilih menjunjung tinggi hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, sejalan dengan prinsip-prinsip PBB dan posisi Indonesia sendiri, tetapi berusaha agar acuan tentang Indonesia dihapus dari resolusi tersebut. Usaha ini gagal dan resolusi yang disetujui pada 12 Desember 1975 menyedihkan intervensi militer Indonesia serta menyerukan penarikan pasukan Indonesia secepatnya. Hal yang sangat menyebalkan pihak Indonesia adalah Australia menjadi satu-satunya negara tetangga yang mendukung resolusi tersebut.*

128. Australia terus mengakui hak Timor atas penentuan nasib sendiri dan menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap cara Indonesia menggabungkan wilayah tersebut. Australia menolak undangan Indonesia untuk menghadiri Majelis Rakyat Timor Timur di Dili pada 31 Mei 1976, dan tidak mengakui majelis tersebut sebagai tindakan sah dalam penentuan nasib sendiri. Kebijakan ini terus dipegang selama konflik. Dalam pernyataan resminya terhadap persoalan tersebut, pemerintah Australia menyampaikan:

Hingga 30 Agustus 1999, posisi Australia adalah bahwa rakyat Timor Timur belum menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri.⁷⁸

129. Namun Australia tidak menjunjung hak tersebut dalam praktiknya. Australia tidak mendukung resolusi-resolusi berikutnya tentang penentuan nasib sendiri di Sidang Umum PBB antara 1976 dan 1981, serta memilih menentang Resolusi Sidang Umum 1982 yang lemah yang tidak menegaskan lagi hak tersebut, serta mengadakan pembicaraan di bawah naungan PBB untuk menyelesaikan konflik. Secara tidak langsung, Australia pun mengabaikan hak tersebut. Pada Januari 1978 secara de facto Australia mengakui kontrol Indonesia atas Timor-Leste. Pengakuan itu diperluas dengan pengakuan de jure sejak 14 Februari 1979, ketika Australia memulai negosiasi dengan Indonesia mengenai perbatasan dasar laut dengan Timor-Leste. Kebijakan-kebijakan ini dan program kerjasama dengan Indonesia setelah itu, termasuk kerjasama dalam bidang pertahanan, berakibat pada penguatan dan pengesahan kedaulatan Indonesia di Timor-Leste.

130. Kebijakan pengakuan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Fraser yang konservatif itu, dilanjutkan oleh pemerintahan Partai Buruh. Pada 17 Agustus 1985—hari kemerdekaan Indonesia—Perdana Menteri Australia dari Partai Buruh, Bob Hawke, tanpa ragu memastikan bahwa Australia mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia di Timor-Leste, dan menganggap rakyat Timor-Leste sebagai warga negara Indonesia. Pada 11 Desember 1989, Menteri Luar Negeri di kabinetnya, Senator Gareth Evans, dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas,

* Pada Oktober, Kedutaan Besar Selandia Baru di Canberra melaporkan bagaimana pemerintah Australia berniat menangani isu tersebut setelah "invasi menjadi berita umum". Mereka menyampaikan kepada Pemerintah Selandia Baru: "Mereka [Indonesia] akan diberitahu bahwa pemerintah Australia tidak memiliki pilihan kecuali bersikap kritis, namun relasi bilateral dengan Indonesia tetap merupakan hal yang sangat penting. Dengan kata lain, 'kami terpaksa menggebukmu, harap mengerti dan bertahanlah'. Tentu saja setiap pernyataan dari Australia, baik yang dikeluarkan di sini maupun kalau perlu di PBB, akan dibuat dengan kata-kata yang selemah mungkin". 17 Oktober 1975, dalam *New Zealand Government East Timor Official Information Act (OIA) Material* (selanjutnya, *NZ OIA Material*), Volume 1.

menandatangani Perjanjian Kerjasama Zona Celah Timor meskipun ada keberatan dari Portugal yang menyatakan bahwa perjanjian ini melanggar hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor.

131. Pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin Perdana Menteri Paul Keating sejak Desember 1991 mempertahankan serta bahkan mengembangkan kebijakan pemerintahan Hawke. Setelah kunjungannya ke Indonesia, Keating menyampaikan kepada Parlemen Australia:

Saya sengaja memilih Indonesia sebagai tempat kunjungan luar negeri saya yang pertama untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah prioritas utama kita.⁷⁹

132. Ia menyarankan agar pelecahan hak-hak asasi manusia di Timor-Leste dibicarakan melalui [proses] rekonsiliasi jangka panjang.

133. Sejak 1975, fraksi-fraksi dalam Partai Buruh Australia (Australian Labor Party, ALP) bersikap kritis terhadap kepemimpinan partai ALP, karena mengabaikan kebijakan partai yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste serta melemahkan kebijakan itu. Ketika di pihak oposisi, juru bicara Urusan Luar Negeri ALP, Laurie Brereton, membuat ulasan kebijakan partai mengenai Timor-Leste, dalam konteks munculnya gerakan demokrasi rakyat di Indonesia dan perkembangan-perkembangan lain; contohnya, pembicaraan-pembicaraan yang diprakarsai PBB, advokasi Portugal mengenai isu ini, dan penguatan kepedulian publik di Australia. Ulasan kebijakannya menyimpulkan bahwa “tidak ada solusi yang tahan lama bagi konflik di Timor-Leste, apabila tidak ada negosiasi yang memungkinkan rakyat Timor-Leste menegakkan hak penentuan nasib sendiri.”⁸⁰ Kebijakan yang diperbarui ini disahkan pada Konferensi Nasional ALP 1998 dan pada Kaukus Federal. Brereton menggunakan kebijakan ini dalam setiap kesempatan, untuk menandingi kebijakan status quo pemerintahan Howard yang berkuasa mulai Maret 1996.

Beralihnya kebijakan Australia

134. Kematian politik Presiden Soeharto dengan segera diakui pemerintah Australia sebagai kesempatan untuk melanjutkan [penyelesaian] masalah Timor-Leste dalam kerangka kedaulatan Indonesia.

135. Setelah tawaran otonomi Presiden Habibie pada 9 Juni 1998, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, mengadakan pembicaraan mengenai persoalan ini di Jakarta dan, menyimpang dari praktik sebelumnya, mengizinkan pembicaraan langsung dengan pihak Timor-Leste. Kegiatan tersebut meliputi kunjungan Duta Besar John McCarthy ke Timor-Leste; pertemuan dengan Xanana Gusmão, pemimpin Resistansi yang ada di penjara, dan permintaan pembebasannya; serta, berdasarkan saran duta PBB Jamsheed Marker, survei tentang opini rakyat Timor baik yang berada di dalam maupun di luar Timor-Leste. Duta Besar Australia untuk PBB, Penny Wensley, dan Duta Besar McCarthy menjadi anggota penting

kelompok-kelompok inti yang dibentuk oleh Jamsheed Marker di New York dan Jakarta untuk isu ini.

136. Survei tentang opini rakyat Timor dilaksanakan pada Juli - Agustus 1998 dan sangat penting dalam mengubah arah kebijakan Australia. Survei ini mencakup semua sisi perdebatan politik dan menemukan bahwa sebagian besar responden Timor sepakat tidak menerima status quo; bahwa solusi apapun, termasuk otonomi, pada akhirnya harus disetujui rakyat, apakah melalui referendum atau proses pengambilan keputusan lain, dan dengan semacam jaminan internasional; serta bahwa peranan Xanana Gusmão penting untuk penyelesaian masalah. Australia membagi hasil survei tersebut kepada pemerintah Indonesia.⁸¹

137. Pada 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia, John Howard, menulis surat kepada Presiden Habibie dan menekankan pentingnya pembicaraan langsung dengan rakyat Timor-Leste secepatnya guna memastikan dukungan mereka terhadap otonomi dalam wilayah Indonesia. Ia juga mencatat dukungan yang semakin bertambah, baik di Timor-Leste maupun secara internasional, untuk penentuan nasib sendiri; dan menyarankan pelaksanaan tindakan penentuan nasib sendiri setelah periode otonomi yang cukup lama, serupa dengan pendekatan yang disetujui di Kaledonia Baru.

138. Presiden Habibie tersinggung dengan pendapat bahwa kehadiran Indonesia di Timor-Leste disamakan dengan kolonisasi Prancis di Kaledonia Baru, tapi mengakui usulan Australia mengenai penentuan nasib sendiri. Pada rapat kabinet 1 Januari 1999, terdapat kesepakatan bahwa Indonesia akan meminta pendapat rakyat Timor-Leste mengenai masa depan mereka dan mengizinkan kemerdekaan apabila rakyat menolak tawaran otonomi khusus.

139. Intervensi Perdana Menteri Howard dimaksudkan untuk memajukan rekonsiliasi dan memastikan Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia, melalui persetujuan bebas rakyatnya. Namun inisiatif itu menghasilkan efek yang berlawanan. Usulan ini menjadi pemicu kemerdekaan dan akhir dari kebijakan integrasionis yang telah menjadi inti kebijakan Australia tentang Timor selama proses dekolonisasi. Pada 6 Desember 1999, Wakil Sekretaris Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, John Dauth, memberitahu Komite Senat Australia bahwa pemerintah Australia akhirnya meninggalkan preferensinya bagi Timor-Leste untuk tetap menjadi wilayah otonomi Indonesia, baru setelah rakyat Timor-Leste memilih merdeka:

Kami selalu menyatakan secara jelas kepada pemerintah Indonesia sepanjang tahun ini bahwa kami menghormati kedaulatannya hingga saat proses-proses yang diprakarsai Presiden Habibie membuahkan hasil yang berbeda.⁸²

140. Pemerintah Australia dan para diplomatnya memainkan peran penting dalam memajukan dan mendukung tindakan penentuan nasib sendiri secara politik, finansial, dan organisasi. Setelah pemungutan suara 30 Agustus 1999 dan meletusnya kekerasan, Australia mengatur dan memimpin International Force in East Timor

(Interfet – Pasukan Internasional di Timor Timur) yang diutus Dewan Keamanan dan membantu mengembalikan proses PBB pada jalurnya, serta memastikan bahwa keputusan rakyat untuk merdeka dihormati dan dilaksanakan.

Kesimpulan

141. Rakyat Timor-Leste menggantungkan harapan yang tinggi pada Australia berdasarkan kedekatannya, kehadirannya selama Perang Dunia Kedua, hubungannya dengan Indonesia, serta reputasinya sebagai negara internasional yang baik dan berpengaruh.

142. Harapan-harapan ini tidak terpenuhi hingga 1999. Australia hanya memberi dukungan nominal selama proses dekolonisasi, tetapi tidak menjunjungnya selama sebagian besar periode ini. Australia hanya mendukung satu pilihan, yaitu integrasi dengan Indonesia, meskipun bukti sejak 1974 telah menunjukkan bahwa tindakan penentuan nasib sendiri akan menentang integrasi. Pendapat Whitlam kepada para pejabat Departemen Luar Negeri pada 1974 bahwa “saya setuju dengan penggabungan [Timor-Leste dengan Indonesia], tapi saya harus melakukan penghormatan terhadap penentuan nasib sendiri”, adalah juga pendapat dari kelima pemerintahan Australia yang menjabat selama era Soeharto.*

143. Australia menjelaskan kepada tingkat tertinggi pemerintahan Indonesia bahwa Australia menentang penggunaan kekerasan di Timor-Leste; tetapi begitu keputusan diambil dan dilaksanakan pada pertengahan 1975, Australia mengetahui dan menerimanya. Australia segera mengakui pendudukan militer Indonesia atas Timor-Leste, dan memberikan pengesahan melalui pengakuan de jure atas kedaulatan Indonesia. Kecuali dalam satu kesempatan, Australia memberikan suara menentang Timor-Leste di Perserikatan Bangsa-Bangsa; meremehkan tanggungjawab Portugal sebagai kuasa pemerintahan;† dan, dengan sikap dan tindakannya, menggerogoti dukungan internasional bagi Timor-Leste.

144. Mantan petugas resmi menteri luar negeri Australia, Kenneth Chan, bersaksi kepada Komisi:

Walaupun saya sudah berusaha untuk memberi laporan yang seimbang akan perkembangan kebijakan Australia terhadap Timor-Leste, penilaian keseluruhan saya terhadap kebijakan selama 25 tahun yang dipertimbangkan di sini ialah bahwa kebanyakan dari

* Dalam pembicaraan pribadi, Whitlam mengatakan kepada pejabat departemen Luar Negeri: “Saya berpihak pada integrasi, tetapi penentuan nasib sendiri perlu dihormati juga. Saya ingin Timor diintegrasikan [dengan Indonesia] tetapi harus dengan cara yang tidak akan menimbulkan argumentasi, karena hal tersebut akan membuat masyarakat Australia lebih kritis terhadap Indonesia.” 24 September 1974. Dokumen, p. 111.

† Australia mengatakan di depan Mahkamah Internasional bahwa Portugal tidak memiliki status sebagai kekuatan administratif Timor-Leste, karena wilayah ini ditinggalkan begitu saja pada 1975, dan Portugal tidak disebutkan sebagai kekuatan administratif di dalam resolusi Sidang Umum PBB pada 1976, 1977 dan 1978. Di samping itu, Portugal telah salah mengelola wilayah itu pada 1974. Krieger hal. 371-477.

kebijakan tersebut merupakan suatu kegagalan. Ada kegagalan untuk mendukung prinsip pokok Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum serta keadilan internasional: hak semua orang terhadap penentuan nasib sendiri. Dan ada juga kegagalan dalam bekerja untuk menahan Indonesia dari jalan intervensi militer dan kekerasan pada 1975, terutama setelah Fretilin mengambilalih kontrol atas Timor-Leste dan membuat deklarasi kemerdekaan secara satu pihak.*

145. Rakyat Timor-Leste menyambut baik dan mengambil manfaat dari dukungan praktis yang kuat dari Australia bagi tindakan penentuan nasib sendiri yang sesungguhnya pada 1999.

Dewan Keamanan, lima anggota tetap, dan Jepang

Dewan Keamanan

146. Dewan Keamanan, yang bermarkas di New York, adalah badan yang paling berpengaruh di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini ditugasi menjaga perdamaian dan keamanan antara bangsa-bangsa sesuai dengan Piagam PBB. Dewan Keamanan terdiri atas 15 anggota: lima anggota tetap, yakni lima negara yang menang dalam Perang Dunia Kedua—Republik Rakyat Cina, Prancis, Federasi Rusia (dahulu Uni Soviet), Inggris Raya, dan Amerika Serikat; dan sepuluh anggota lainnya yang dipilih oleh Sidang Umum setiap dua tahun.

147. Timor Portugis menjadi subjek pembicaraan Dewan Keamanan pada tahun 1960-an, ketika Portugal dikritik karena gagal memenuhi kewajibannya menurut Piagam PBB. Hal ini berubah setelah 1974 dan, menanggapi permintaan Portugal, Dewan Keamanan bersidang pada 15 Desember 1975 untuk membicarakan intervensi Indonesia ke dalam wilayah Timor Portugis.

148. Pada 22 Desember 1975, Dewan Keamanan mengesahkan resolusi yang meminta semua negara menghormati integritas wilayah Timor Portugis dan hak rakyat Timor Portugis atas penentuan nasib sendiri.⁸³ Resolusi ini mengecam intervensi militer Indonesia dan menyesali Portugal yang tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Bab XI Piagam PBB. Resolusi ini meminta Indonesia menarik semua pasukannya dari wilayah ini tanpa menunda-nunda dan meminta Portugal, sebagai kuasa pemerintahan, bekerjasama sepenuhnya dengan

* Kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri, 15-17 Maret 2004. Chan bekerja di dalam Departemen Urusan dan Perdagangan Luar Negeri dari 1972 sampai 1978. Dia mewakili Australia di PBB pada periode 1979-1982, saat dia sebagian besar berurusan dengan isu-isu dekolonisasi. Dia ialah administrator atas Kepulauan Cocos (Keeling) pada 1984, ketika rakyat kepulauan tersebut memilih untuk bergabung dengan Australia.

PBB untuk memungkinkan rakyat Timor-Leste menegakkan hak penentuan nasib sendiri dengan bebas. Resolusi ini juga meminta semua negara dan pihak-pihak lain untuk bersama-sama PBB meraih solusi damai bagi situasi saat itu, dan untuk memfasilitasi dekolonisasi serta meminta Sekretaris Jenderal mengirim utusan khusus ke wilayah ini, karena keadaan sangat mendesak, untuk membuat penilaian di tempat dan menghubungi semua pihak dan negara guna memastikan pelaksanaan resolusi ini.⁸⁴ Resolusi ini disahkan dengan suara bulat.

149. Dewan Keamanan tidak mengutuk Indonesia, baik tentang agresi maupun penggunaan kekerasan yang tidak sah. Ia mendeskripsikan aksi Indonesia sebagai ‘intervensi’ bukan ‘invasi’; membatasi dirinya dengan menuntut Indonesia untuk menarik pasukannya, dan tidak merekomendasi atau menjatuhkan hukuman atas sikapnya.

150. Utusan Khusus Sekretaris Jenderal (Special Representative of the Secretary-General; SRSG), Vittorio Winspeare Guicciardi, mengunjungi Timor-Leste pada Januari. Karena halangan Indonesia, ia tidak dapat bertemu dengan wakil-wakil Fretilin dan laporannya tidak memberi hasil yang diinginkan.⁸⁵

151. Setelah menerima laporan tersebut, Dewan Keamanan bertemu pada 22 April 1976 untuk menyetujui resolusi lebih lanjut. Isi resolusi ini pada dasarnya sama dengan resolusi Desember, termasuk permohonan agar Utusan Khusus Sekretaris Jenderal melanjutkan tugasnya, tapi menghilangkan dua hal: paragraf yang “mengancam” intervensi bersenjata Indonesia, dan paragraf yang “menyesali” kegagalan Portugal.⁸⁶ Dua belas negara setuju akan resolusi ini, satu tidak setuju, dan dua abstain: Jepang dan Amerika Serikat.*

152. Indonesia tidak memenuhi permintaan kedua Dewan Keamanan tersebut, yaitu untuk menarik pasukannya, dan tidak ada sanksi yang dijatuhkan bagi penolakan ini. Permintaan agar Utusan Khusus Sekretaris Jenderal kembali mengunjungi Timor-Leste dan melanjutkan pembicaraan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, tidak ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal, Kurt Waldheim. Diplomat Inggris di PBB, Richard Dalton, melaporkan bahwa José Ramos-Horta menantang Sekretaris Jenderal karena gagal menjalankan Resolusi 389. Dalton menulis:

Winspeare telah diperintah untuk tidak mengambil inisiatif apapun. Ia mengatakan kesediaannya bila pihak-pihak yang berkepentingan ingin berkonsultasi dengan dia; tapi ia sendiri tidak akan berusaha mempertemukan mereka. Menurut Schlittler-Silva, seorang Brasil yang menemani Winspeare dan yang masih berhubungan dengan isu itu di Sekretariat, apabila Sekretaris Jenderal ditantang mengenai alasan Resolusi 389 tidak ditindaklanjuti, ia siap mengatakan bahwa belum ada anggota Dewan yang mendesaknya.†

* Satu anggota (Benin) tidak ikut dalam pemungutan suara.

† 11 Juni 1976. dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi Inggris, Dowson File 7.25. Sekretaris Jenderal Waldheim tidak menolak dilakukannya tindakan penentuan nasib sendiri ala Irian Barat untuk Timor-Leste. Ia menginformasikan Luard, Parliamentary Under-Secretary of State, Foreign and Commonwealth

153. Dewan Keamanan tetap “mengagendakan isu itu” tetapi tidak membahasnya kembali hingga 1999.

154. Pada 1982, Sekretaris Jenderal sekali lagi diminta memainkan peran langsung. Resolusi Sidang Umum 37/30 meminta Sekretaris Jenderal Javier Perez de Cuellar “untuk memprakarsai pembicaraan dengan semua pihak yang berkepentingan langsung, dengan maksud menggali kesempatan guna mencapai penyelesaian menyeluruh atas isu ini.” Dengan bantuannya, pembicaraan antara Indonesia dan Portugal mulai dilaksanakan pada 1983. Pembicaraan tersebut tidak menghasilkan kemajuan yang berarti dan pihak Resistansi Timor tidak disertakan sebagai salah satu dari “pihak-pihak yang berkepentingan langsung”. Namun, kegigihan Sekretariat untuk memajukan isu yang tampak sangat sulit diselesaikan itu merupakan tanda dalam dunia diplomasi yang serba simbolis bahwa, meskipun terbelengkalai, isu ini masih bertahan dalam agenda PBB.

155. Pada akhir 1992, perundingan antara Portugal dan Indonesia dilanjutkan setelah sempat dihentikan oleh Portugal menyusul pembantaian Santa Cruz. Pada waktu yang bersamaan, diplomat PBB berpengalaman, Francesc Vendrell, menjadi Direktur untuk Asia Tenggara dan Pasifik, lalu Direktur untuk Asia dan Pasifik di Sekretariat PBB. Keterlibatannya dan penunjukan Tamrat Samuel untuk memegang berkas Timor-Leste sangat berarti dalam memperkuat kapasitas Sekretaris Jenderal antara 1993 dan 1999.[†]

156. Kedua pejabat ini memusatkan perhatian pada memajukan partisipasi rakyat Timor-Leste dalam negosiasi tersebut. Berdasarkan saran mereka, Sekretaris Jenderal mendapat izin dari Indonesia bagi Utusan Khusus, Amos Wako, saat itu Jaksa Agung di Kenya, untuk menemui Xanana Gusmão yang ada di dalam penjara dan diberitakan menyetujui integrasi. Francesc Vendrell menyampaikan pada audiensi publik CAVR:

Kini saya dapat memberitahu Anda, bahwa ketika Wako dan Tamrat Samuel, yang juga menemaninya, mengunjungi penjara untuk bertemu dengan Xanana, Xanana menyelundupkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal. Dalam surat itu dia menyatakan dan menegaskan kembali komitmennya untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan tanah airnya.⁸⁷

Affairs bahwa: “Ia bisa memperkirakan adanya semacam penentuan nasib sendiri di bawah naungan PBB, tetapi belum jelas dalam bentuk apa. Tentu saja pihak Indonesia ingin agar PBB melegalisasi ‘Anschluss’-nya.... Sebuah proses serupa dengan yang diterapkan di Irian Barat dapat dipertimbangkan, apabila Indonesia bisa menerimanya.” British FCO Record of Conversation, 15 Mei 1976. dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi Inggris, Dowson File 4.

* 23 November 1982, dalam Krieger, hal. 128. Javier Perez de Cuellar melakukan kontak bilateral terpisah dengan Indonesia dan Portugal, sejak awal 1982, ketika ia menjadi Sekretaris Jenderal. Dalam pekerjaannya ia dibantu oleh Under-Secretary-General Rafeeuiddin Ahmed.

† Arnold Kohen menggambarkan Francesc Vendrell sebagai “pejabat PBB yang berperan paling signifikan dalam isu Timor-Leste sejak 1975”. *From the Place of the Dead: Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, Lion Publishing, Oxford, 1999, hal. 289.

157. Mengomentari pertanyaan tentang apakah pantas seorang pejabat PBB membawa dokumen semacam itu, Vendrell mengatakan keyakinannya bahwa ia bertugas memastikan agar pandangan orang Timor disampaikan ke negosiasi tersebut. Ia berbicara dalam audiensi:

Orang-orang mungkin berkata bahwa tim ini tidak bersikap netral. Namun kami melihat diri kami bersikap objektif. Objektivitas tidaklah sama dengan netralitas. Isu Timor-Leste masuk ke inti nilai-nilai dan prinsip-prinsip PBB, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kalau Anda bekerja pada PBB, Anda tidak bisa netral mengenai isu-isu ini... Kami bekerja demi hak rakyat Timor untuk menjalankan hak penentuan nasib sendiri... Dua pihak yang berunding adalah Indonesia, kekuatan pendudukan, dan Portugal, kuasa pemerintahan sah. Rakyat Timor-Leste tidak terwakili.⁸⁸

158. Sesuai dengan tujuan ini, Vendrell dan Tamrat Samuel menemui Uskup Belo, para pastor dan suster di Dili pada 1994, dan terkesan oleh tingkat dukungan bagi penentuan nasib sendiri serta keyakinan mereka pada Perserikatan Bangsa-Bangsa:

Salah satu hal yang paling mengharukan adalah keyakinan luarbiasa yang dimiliki setiap orang pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tamrat dan saya merasa tanggung jawab, yakni kami harus melakukan yang terbaik atas nama rakyat yang hanya dapat berpaling pada PBB untuk memperoleh dukungan.⁸⁹

159. Dialog Menyeluruh Antar-Timor (All-Inclusive intra-East-Timorese Dialogues, AIETD) yang disponsori PBB merupakan hasil dari pengalaman itu. Francesc Vendrell dan Tamrat Samuel merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal agar ia meminta Menteri Luar Negeri Portugal dan Indonesia untuk menerima ide dialog guna menyatukan masyarakat Timor dari dalam Timor-Leste dengan masyarakat Timor-Leste yang sedang dalam pengasingan:

Pada dasarnya, apabila mereka bertemu dan dibiarkan berdiskusi sendiri, mungkin mereka akan menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, dan mampu mencapai proposal bersama mengenai Timor-Leste.⁹⁰

160. Hal ini disetujui, dan dengan dukungan dari pemerintah Austria, beberapa pertemuan telah dilakukan. Pertemuan-pertemuan tersebut tidak mengeluarkan hasil secara politik, tapi dalam pertimbangan Francesc Vendrell, pertemuan-pertemuan itu telah menolong masyarakat Timor yang terlibat untuk menyadari bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan.

161. Dengan pengangkatannya sebagai Sekretaris Jenderal pada 1997, Kofi Annan meningkatkan perhatian atas isu Timor-Leste. Segera setelah penganugerahan

Hadiah Nobel Perdamaian kepada José Ramos-Horta dan Uskup Carlos Ximenes Belo pada Desember 1996, penunjukan Jamsheed Marker dari Pakistan sebagai Utusan Pribadinya untuk Timor-Leste pun memperkuat upaya PBB. Dalam apa yang disebut inovasi oleh Kofi Annan, Duta Besar Marker dan rekan-rekannya membentuk 'kelompok inti' negara-negara untuk menyelesaikan persoalan Timor. Kelompok ini beranggotakan Australia, Jepang, Selandia Baru, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Para pejabat kelompok tersebut juga terlibat dalam diplomasi bolak-balik yang kuat antara New York, Jakarta, Lisabon, dan Timor-Leste, termasuk pembicaraan dengan semua pelaku utama. Usahanya makin meningkat setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan keputusan Presiden Habibie pada Juni 1998 untuk memberi 'otonomi luas' kepada Timor-Leste.

162. Jamsheed Marker menyatakan rasa hormatnya kepada Kofi Annan karena keputusannya untuk memprioritaskan persoalan Timor di PBB:

Bila merenungkan urutan kejadian saat itu, saya tetap yakin bahwa tanpa adanya keputusan awal Kofi Annan untuk memulai proses negosiasi mengenai Timor- Timur, yang bukan sekadar diperhatikan tetapi diperjuangkan dengan gigih setiap saat, PBB tidak akan mampu meraih semua kesempatan yang timbul akibat desentralisasi politik di Indonesia. Dengan lain kata, ibarat kami yang memegang bola dan kamilah yang melarikannya ke gawang begitu mendapat kesempatan.⁹¹

163. PBB memperoleh kesempatan untuk "melarikan bola" ketika pada Januari 1999 Pemerintah Habibie mengumumkan 'pilihan kedua' bagi rakyat Timor-Leste Timur: pilihan antara otonomi dan kemerdekaan. Pada 11 Maret, Sekretaris Jenderal bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, dan Menteri Luar Negeri Portugal, Jamie Gama, dan menyetujui Jajak Pendapat langsung mengenai 'pilihan kedua' yang diatur oleh PBB, kemudian mengirim misi penilaian PBB ke Timor-Leste yang dikepalai Francesc Vendrell, wakil Jamsheed Marker selama negosiasi berlangsung.

164. Mengingat situasi sengit yang berlangsung di wilayah ini, persoalan paling penting bagi PBB adalah keamanan dan kepastian bahwa Jajak Pendapat akan dijalankan dengan damai dan bebas. Dalam pertemuan tripartit berikutnya pada 22 April, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, dengan datar menolak permintaan PBB yang menyatakan agar pasukan Indonesia dikantongkan atau dilokalisasi di wilayah-wilayah tertentu satu bulan sebelum Jajak Pendapat. Pada pertemuan tingkat tinggi mereka di Bali pada 27 April, Presiden Habibie juga menolak usulan Perdana Menteri Australia untuk menerima kehadiran pasukan perdamaian internasional.

165. Pada 5 Mei 1999 pertemuan tripartit terakhir dilaksanakan di New York antara Kofi Annan, Menteri Luar Negeri Alatas, dan Gama; dan tiga butir Kesepakatan yang berkaitan dengan Jajak Pendapat ditandatangani. Tiga butir Kesepakatan tersebut antara lain mengizinkan pengambilan suara secara langsung, rahasia, dan umum; pembentukan misi PBB untuk melaksanakan Jajak Pendapat; serta memercayakan

keamanan kepada pihak Indonesia.⁹² Mereka didukung oleh Dewan Keamanan pada 7 Mei, yakni kali pertama Dewan Keamanan membicarakan masalah Timor-Leste sejak April 1976.⁹³ Pada 11 Juni, Dewan Keamanan membentuk Misi PBB di Timor Timur (UN Mission in East Timor - UNAMET). Ian Martin ditunjuk sebagai Wakil Khusus bagi Sekretaris Jenderal PBB untuk Timor Timur dan kepala UNAMET.

166. Meskipun dianggap hal yang bersejarah, tiga butir Kesepakatan tersebut mendapat sambutan beragam. Pada satu sisi, Kesepakatan tersebut melambangkan kemenangan diplomasi internasional dan, dengan dilatarbelakangi kepalsuan Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 di Irian Barat dan Majelis Rakyat Timor Timur pada Mei 1976, merupakan bukti baik bahwa Indonesia menuju demokratisasi. Pada sisi lain, ada kekhawatiran bahwa memercayakan keamanan kepada pihak Indonesia akan mengundang bencana. Dalam minggu-minggu sebelum pemungutan suara, yang ditunda karena alasan keamanan, José Ramos-Horta memprediksikan kekerasan dan meminta agar komunitas internasional mengambil langkah-langkah pencegahan:

Skenario terburuk—yang nyata—adalah kekerasan akan terjadi; bahwa kekerasan tersebut ditargetkan pada PBB; bahwa mereka mengundurkan diri dan terjadi pertumpahan darah yang luarbiasa di Timor-Leste. Mereka—bukan hanya PBB tetapi negara-negara yang benar-benar penting, seperti Australia—harus menciptakan kondisi untuk memastikan hal ini tidak terjadi.⁹⁴

167. Dalam kesaksiannya kepada CAVR pada Audiensi Publik Nasional tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Ian Martin, kepala UNAMET, mengakui bahwa kritik utama terhadap Kesepakatan tersebut adalah mengenai diletakkannya keamanan di tangan militer Indonesia. Meskipun ia bukan bagian dari negosiasi, ia berkata:

*Saya sudah panjang-lebar memikirkan hal ini, dan saya setuju dengan pendapat dari para negosiator bahwa tekanan sekeras apapun terhadap Presiden Habibie pada awal 1999 tidak akan menghasilkan diterimanya Pasukan Penjaga Kedamaian. Dengan demikian, saya merasa lebih baik mengambil risiko, daripada kehilangan kesempatan untuk penentuan nasib sendiri yang tertutup selama 24 tahun dan yang akan tertutup lagi setelah Habibie.*⁹⁵

168. Dalam kesaksiannya kepada Komisi, Ian Martin juga menjawab kritik bahwa UNAMET dianggap bersikap berat sebelah supaya hasil pemungutan suara adalah kemerdekaan, dan bahwa kekerasan yang terjadi setelah pemungutan suara dipancing kemarahan pihak Timor Timur prointegrasi karena proses dan hasil yang tidak adil. Ia berkata:

.....
* Ian Martin adalah Sekretaris Amnesty International 1986-92. Sebelum menjabat sebagai kepala UNAMET, ia bertugas dalam beberapa jabatan hak asasi manusia untuk PBB di Haiti, Rwanda, dan Bosnia-Herzegovina.

Saya pikir ini hanya pandangan Indonesia dan kelompok-kelompok orang Timor Timur prointegrasi dan tidak memiliki kredibilitas di tempat lain, tetapi pertanyaan ini penting untuk dijawab. Menurut pendapat saya, usaha belum cukup dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini di Indonesia, khususnya ketika hal ini diteruskan sampai ke sidang-sidang di hadapan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Jakarta, oleh jaksa dan pembela. Para saksi TNI dalam pengadilan-pengadilan tersebut dibiarkan begitu saja ketika mereka menyatakan kebohongan paling mencolok, misalnya ketika mengatakan bahwa polisi sipil PBB telah mengambilalih tanggungjawab keamanan di Timor Timur, atau bahwa kotak-kotak suara ditemukan di rumah Uskup Belo, dan lain-lain.

169. Martin menjelaskan:

UNAMET bukannya prokemerdekaan: UNAMET hanya berkomitmen agar rakyat Timor Timur bisa menjalankan haknya, yang diakui secara internasional, atas penentuan nasib sendiri... Prosedur pendaftaran dan pengumpulan suara yang kami tempatkan dan jalankan diperhatikan secara cermat oleh Komisi Pemilihan Independen, yang menyelenggarakan audiensi publik mengenai keluhan-keluhan pada hari-hari setelah pemungutan suara, serta oleh berbagai pengamat internasional. Semua pengamat yang netral menilai, pemilihan telah dijalankan dengan adil dan efisien, meskipun dalam kondisi yang sulit dan hambatan waktu.

170. Ia kemudian menyatakan bahwa aspek-aspek Jajak Pendapat bersifat tidak adil bagi pendukung kemerdekaan.

[Jajak Pendapat] itu berpihak kepada pendukung integrasi karena pihak Indonesia gagal memenuhi komitmen yang dijanjikan. Komitmen tersebut, di antaranya, bahwa pejabat pemerintah Indonesia akan bersikap netral, dan bahwa pejabat pemerintah asal Timor hanya berkampanye dalam kapasitasnya sebagai individu tanpa menggunakan dana dan fasilitas pemerintah ataupun “tekanan jabatan”. Semua ketentuan tersebut dilanggar secara terang-terangan tanpa menghiraukan protes UNAMET.⁹⁶

171. Pemungutan suara berlangsung relatif damai, dan hari pelaksanaan pemungutan suara merupakan hari kemenangan kecil bagi sebagian besar rakyat Timor-Leste. Setelah pecah kekerasan, Presiden Habibie, di bawah tekanan internasional yang kuat, menyetujui mengundang PBB mengirim pasukan internasional untuk memulihkan ketertiban. Hal ini disahkan oleh Dewan Keamanan pada 15 September 1999.⁹⁷

172. Pada 20 Oktober 1999, badan legislatif tertinggi Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengakui hasil Jajak Pendapat Timor-Leste

dan mencabut TAP MPR 1978, yang menyatakan penggabungan Timor Timur ke Indonesia.' Pada hari yang sama, Presiden Habibie turun dari kursi kepresidenan untuk digantikan Abdurrachman Wahid.

173. Pada 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan menyambut baik keputusan MPR dan mendirikan Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur (UN Transitional Administration in East Timor, UNTAET). Resolusi ini disetujui secara mutlak dan memberi wewenang kepada UNTAET untuk menjalankan semua otoritas legislatif dan eksekutif, antara lain pelaksanaan kehakiman, dan membantu Timor-Leste mempersiapkan pemerintahan sendiri. Kofi Annan menunjuk Sergio Vieira de Mello dari Brasil sebagai Wakil Khusus bagi Timor Timur yang baru dan Kepala Pemerintahan Transisi.[†]

174. Disetujuinya Resolusi Dewan Keamanan pada 25 Oktober menandai pengalihan otoritas atas Timor-Leste dari Indonesia kepada PBB. (Mengenai berakhirnya peranan Portugal yang formal, lihat segmen mengenai Portugal dalam bab ini; paragraf 59.)

Cina

175. Republik Rakyat Cina (RRC) yang bergabung dengan PBB pada 1971 merupakan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan.[‡] Berkaca pada pengalaman sendiri tentang latar belakang kolonialnya yang sering memalukan, Cina secara tradisional telah mengambil posisi kuat dalam hal kedaulatan, kemandirian, penentuan nasib sendiri, dan hak-hak Dunia Ketiga. Cina khususnya sensitif terhadap apa yang mereka anggap pengaruh Barat yang berlebihan pada sistem internasional, termasuk campurtangan luar dalam masalah internal sebuah negara, atas nama intervensi kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta pemaksaan pengertian tentang hak asasi manusia yang bersifat individualistis.

176. Cina menentang kolonialisme Portugal di Afrika dan berencana menggabungkan Makau [ke Cina],[§] meskipun dulu dan hingga saat ini masih tetap menentang kemerdekaan bagi Taiwan dan Tibet.

* Beberapa legislator Indonesia percaya bahwa pihak legislator dan bukan presiden yang berhak mengambil keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan, dan bahwa dengan menyetujui Kesepakatan 5 Mei Presiden Habibie tidak mengikuti prosedur yang benar.

† Pada waktu diangkat Sergio Vieira de Mello adalah Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Kemanusiaan dan Bantuan Darurat di PBB. Ia pernah menjabat sebagai Pembantu Komisaris Tinggi untuk Urusan Pengungsi. Ia tengah bertugas sebagai Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB di Irak, ketika terbunuh secara tragis pada 19 Agustus 2003 akibat serangan bom terhadap kantor PBB

‡ Menyusul revolusi komunis Cina pada 1949 dan munculnya Perang Dingin, Taiwan menempati kursi 'Cina' di PBB. Pada 1971, PBB mengakui RRC sebagai wakil sah Cina satu-satunya dan menggantikan Taiwan di PBB.

§ Portugal mengembalikan Makau kepada Cina pada Desember 1999. Sekarang Makau disebut Daerah Administrasi Khusus Makau (SAR, Macau Special Administrative Region) dan memiliki otonomi luas kecuali dalam bidang luar negeri dan pertahanan.

177. Indonesia mengakui Republik Rakyat Cina pada 1950, dan hubungan Cina-Indonesia pada periode Sukarno pada umumnya berlangsung positif. Hubungan tersebut memburuk dengan tajam pada 1965, ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pro-Beijing dituduh mencoba melakukan kudeta di Jakarta. Di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, Indonesia menerapkan larangan diskriminatif terhadap kebudayaan dan praktik keagamaan Cina, termasuk melarang penggunaan nama Cina, teks Cina, serta pengajaran bahasa Cina di sekolah-sekolah. Dukungan pemerintah Soeharto pada Vietnam yang pro-Moskow juga mengecewakan Cina.

178. Pemerintah Soeharto khawatir Cina akan campurtangan dalam masalah Timor Portugis. Pada 1974 – 1975, Presiden Soeharto dan para penasihatnya berulang kali menyatakan kekhawatirannya kalau Timor-Leste yang merdeka, condong ke kiri, dan lemah secara ekonomi akan mencari dukungan Cina. Para pejabat Indonesia setuju ketika Sekretaris Departemen Luar Negeri Australia, Alan Renouf, memberitahu mereka pada Oktober 1974 bahwa:

dia memperkirakan niat Cina akan menjadi kekhawatiran khusus bagi Indonesia. Dia menyatakan bahwa terdapat 10.000 orang Cina di Timor Portugis, dan meskipun saat itu mereka berorientasi pada Taiwan, kesetiaan mereka dapat berubah.⁹⁸

179. Presiden Soeharto mengangkat masalah tersebut pada kedua kesempatan saat dia membahas Timor dengan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam.

180. Baik Renouf maupun Whitlam berusaha menenangkan kekhawatiran Indonesia. Dalam sebuah surat pada Presiden Soeharto, Whitlam menulis:

Kami tidak memiliki bukti yang mendukung kekhawatiran tentang masalah ini. Saat ini kami berpendapat bahwa Cina, Uni Soviet, atau negara adikuasa lainnya hanya sedikit saja tertarik terhadap Timor Portugis; dan menurut hemat kami negara-negara yang mungkin tergoda untuk ikut campur, akan berhati-hati agar tidak membahayakan hubungan mereka dengan Indonesia.⁹⁹

181. Para diplomat di negara-negara lain dan PBB setuju dengan penilaian ini dan menyampaikan pandangan mereka kepada pemerintah Soeharto.*

182. Fretilin menyertakan Cina dalam strategi internasionalnya untuk mendapat perhatian dan dukungan, tapi inisiatif tersebut dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkuat klaimnya bahwa Fretilin adalah komunis. Pers yang dikontrol pemerintah dan surat kabar militer *Berita Yudha* memuat cerita-cerita yang

* Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Politik, Perwalian, dan Dekolonisasi PBB, Tang Ming-Chao, memberitahu Whitlam ketika berkunjung ke Canberra pada September 1975 bahwa meskipun ia seorang pegawai negeri internasional, ia dapat memastikan "bahwa Cina tidak memiliki kepentingan di Timor Portugis". Dokumen 227, Canberra, 12 September 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 406-408

mengklaim adanya infiltrasi Komunis Cina ke Timor, pendanaan demonstrasi-demonstrasi dan keterlibatan Maois, termasuk pembicaraan tentang kunjungan rahasia empat orang jenderal Cina ke Timor-Leste melalui Australia. Presiden UDT, Francisco Lopes da Cruz, mengklaim pada April 1975 bahwa “agen-agen di Indonesia dan Taiwan” milik UDT telah mengonfirmasi hubungan Cina dengan Timor.’

183. RRC adalah satu-satunya negara penting di Asia yang mendukung Fretilin, dan satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan yang mengakui deklarasi kemerdekaan unilateral dan pembentukan Republik Demokratik Timor-Leste. Cina mendukung dua resolusi Dewan Keamanan PBB yang dijalankan sebagai tanggapan terhadap invasi Indonesia, dan sangat mengutuk tindakan-tindakan Indonesia. Perwakilan Cina, Huang Hua, memberi tahu Dewan Keamanan pada Desember 1975:

Agresi terang-terangan pemerintah Indonesia terhadap Republik Demokratik Timor-Leste telah membongkar ambisi liar Indonesia untuk membasmi pasukan-pasukan patriotik rakyat Timor-Leste, mencekik Republik Demokratik Timor-Leste yang baru lahir, dan kemudian mewujudkan skemanya yang telah lama direncanakan untuk menjajah Timor-Leste. Tindakan-tindakan pemerintahan Indonesia di atas, melanggar semua tujuan dan prinsip Piagam PBB. Delegasi Cina hanya dapat memperlihatkan kemarahannya dan mengutuknya.¹⁰⁰

184. Pengakuan Cina terhadap RDTL berarti Cina menerima bahwa deklarasi kemerdekaan unilateral Fretilin adalah tindakan penentuan nasib sendiri. Tapi, hal ini tidak mencegah Cina untuk memberi dukungannya, dengan satu pengecualian, pada resolusi Sidang Umum PBB tentang Timor-Leste antara 1975 dan 1982.

185. Cina juga menyediakan bantuan praktis bagi Fretilin. José Ramos-Horta menulis:

Sementara Moskow menjaga jarak dengan Fretilin, Beijing memberikan keramah tamahan dan dukungan diplomatik aktif. Saya pribadi mengunjungi RRC pada awal 1976, seperti juga perwakilan-perwakilan Fretilin lainnya. Cina juga memberikan kata-kata dukungan yang kuat di PBB, begitu pula bantuan finansial.¹⁰¹

186. Bantuan-bantuan ini tidak termasuk bantuan militer, meskipun Fretilin memintanya melalui Menteri Pertahanan, Rogério Lobato, yang mengunjungi Cina tidak lama setelah invasi Indonesia dan bertemu dengan Jenderal Chèn His-lien, komandan senior dalam Tentara Pembebasan Rakyat (TPR), serta mengunjungi sebuah unit TPR. Duta Besar Australia untuk Cina, Stephen Fitzgerald, diminta oleh

* Dokumen 131, Jakarta, 12 Mei 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 259. James Dunn menyangkal cerita-cerita dari November 1974 ini dengan menyebutnya propaganda. Ia khususnya sangat kritis tentang “kebohongan belaka” yang disebar oleh Francisco Lopes da Cruz pada September 1975, misalnya klaimnya bahwa 20 orang “pelatih militer” asal Vietnam Utara telah mengajar prajurit-prajurit Fretilin. James Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, Longueville Books, 2003, hal. 72, 183.

Pemerintah Australia untuk melakukan verifikasi terhadap klaim-klaim bantuan militer pada pejabat-pejabat Cina, dan berkesimpulan bahwa:

Posisi Cina saat ini tampaknya didikte oleh sikap moral bahwa Indonesia seharusnya dikecam karena tindakan agresi terbukanya, padahal sebelumnya Cina tidak berniat terlibat. Setelah invasi Indonesia, Cina terpaksa, meskipun dengan segan, mengambil posisi dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Saat itu, Fretilin tampaknya merupakan partai pribumi yang paling mudah diidentifikasi karena konsisten dengan kebijakan-kebijakan mereka sendiri.*

187. Duta Besar Fitzgerald percaya bahwa pada saat itu Cina belum menyangkal masalah bantuan militer. Tapi, dengan kata-kata Perdana Menteri Cina, Ch'iao Kuan-hua, pada perjamuan selamat datang pada 29 Desember 1975, bahwa "rakyat Timor -Leste... pasti akan memenangi kemerdekaan nasional selama mereka gigih bergantung pada diri sendiri dan perjuangan keras", maka ia memastikan bahwa itu berarti "tidak".

188. Pemerintah Inggris percaya bahwa kata-kata keras Cina di Dewan Keamanan seharusnya tidak diterima mentah-mentah. Dalam sebuah telegram ke London pada 2 Januari 1976, Duta Besar untuk Indonesia, John Ford, menulis:

Mengenai kunjungan delegasi Fretilin ke Peking dan dukungan terbuka Cina pada Fretilin, pihak Cina tampaknya telah berkomentar bahwa dukungan mereka terhadap Fretilin sebaiknya tidak usah terlalu diperhatikan: "ada waktunya ketika meriam perlu ditembakkan, meski hanya menembakkan bola-bola kertas".¹⁰²

189. Pada Juli 1976, Cina meyakinkan Perdana Menteri Australia, Malcolm Fraser, bahwa Cina tidak akan ikut campur dalam masalah internal Indonesia.¹⁰³

190. Indonesia diuntungkan oleh hubungannya dengan Cina, meski Fretilin dituntut karena menginginkan hubungan yang sama. Dukungan Cina pada Timor-Leste melemah pada 1980-an karena hubungannya yang membaik dengan Indonesia, dan karena merasa bahwa usaha untuk meraih kemerdekaan adalah sia-sia. Indonesia mengurangi posisi pro-Vietnamnya dan Cina mengambil pendirian yang lebih netral terhadap Timor-Leste. Pada 1985, Indonesia mengendurkan larangan hubungan dagang dengan Cina yang menghasilkan keuntungan aliran finansial spektakuler dan meningkatkan pertukaran bilateral. Pada Agustus 1990, kedua negara menormalisasi hubungan dan, sebagai bukti hubungan yang

* 7 Januari 1976. Dokumen, hal. 663-64. Pengertian akan posisi Cina ini dikonfirmasi oleh Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Winspeare Guicciardi yang mengatakan bahwa sebelum ia meninggalkan New York untuk mengunjungi Timor-Leste dan sekitarnya pada Januari 1976, ia diberitahu oleh Tang Ming-Chao [Wakil Sekretaris Jenderal untuk Dekolonisasi] bahwa menurut Cina "misi Winspeare akan memiliki nilai hanya jika ia mendesak pihak Indonesia untuk 'langsung pergi.'" Laporan oleh pejabat Pemerintah Australia, 10 Februari 1976. Documents, hal. 705.

sangat membaik, Presiden Soeharto mengunjungi Beijing pada 1991. Untuk mengakomodasi keberatan dari pihak nasionalis dan militer, pemerintah Soeharto mendapat kesepakatan dari Cina bahwa Cina tidak akan menyediakan bantuan bagi tindakan subversi atau ikut campur dalam masalah dalam negeri Indonesia.

191. Cina mendukung Resolusi Dewan Keamanan pada 1999 yang membenarkan tindakan penentuan nasib sendiri yang akan diatur oleh PBB. Sejalan dengan prinsipnya yang menentang intervensi terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi, Cina mencoba memengaruhi blok Asia agar mendukung Indonesia pada 1999 untuk menentang penyelidikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di Timor pada tahun itu. Hal ini tidak berhasil. Tapi, Cina berhasil menghilangkan sebagian referensi pada penyelidikan-penyelidikan hak asasi manusia sebelum membiarkan Dewan Keamanan membenarkan campurtangan Interfet pada September 1999.

Prancis

192. Prancis ialah salah satu negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, anggota tetap Dewan Keamanan, dan negara donor bagi anggaran organisasi tersebut. Pemerintah Prancis berkomitmen melakukan koordinasi kebijakan luar negerinya dengan menerapkan semua tujuan dan prinsip PBB, yang banyak memiliki persamaan dengan tradisi republik Prancis.

193. Prancis tidak mendukung inisiatif-inisiatif dekolonisasi yang dilakukan PBB pada 1960-an. Prancis abstain dalam mendukung deklarasi bersejarah mengenai Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Bangsa Jajahan (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples) pada 14 Desember 1960, serta prinsip-prinsipnya yang berkaitan dengan pelaporan tentang koloni. Pada periode yang sama, Prancis bergabung dengan Portugal dalam menentang pendaftaran Timor oleh Sidang Umum sebagai sebuah wilayah yang tak berpemerintahan sendiri.

194. Pemerintah Prancis mendukung Resolusi Dewan Keamanan 384 yang disetujui dengan suara bulat pada 22 Desember 1975, sebagai tanggapan terhadap invasi Timor-Leste oleh Indonesia. Prancis menegakkan hak rakyat Timor-Leste untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, serta mengimbau Indonesia agar menarik mundur pasukannya, tapi mengambil pendekatan secara damai pada masalah tersebut. Berbicara dalam debat Dewan Keamanan pada 18 Desember, wakil Prancis, M. LeCompt, mendesak kerjasama ketimbang saling menyalahkan:

Misi Dewan dalam kasus ini bukan untuk menyalahkan, apalagi untuk menimpakan kesalahan pada salah satu pihak yang terlibat. Kami tahu bahwa situasi-situasi sejarah jarang sekali sederhana, sehingga yang baik dan yang jahat tidak dapat ditentukan berdasarkan pandangan dari satu pihak saja. Timor juga bukan pengecualian terhadap aturan itu.¹⁰⁴

195. Prancis juga memilih mendukung resolusi Dewan Keamanan yang kedua, yang disetujui pada 22 April 1976. Prancis lagi-lagi menegakkan hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, tapi menyesali resolusi tersebut tidak menyertakan rekomendasi dari Jepang untuk mengakui niat baik Indonesia serta keputusannya untuk menarik mundur pasukannya. Dalam sebuah pernyataan penjelasan yang ambigu, wakil Prancis, M. Travert, memberitahu Dewan:

Daripada terus memikirkan masa lalu dan menyalahkan pihak ini atau itu, kita sekarang harus melihat ke depan. Masa depan Timor-Leste harus didasarkan pada rekonsiliasi nasional, penghentian total permusuhan, dan bersatunya keragaman partai, yang perbedaannya tampaknya bagi kami tidak terlalu fundamental dibanding dengan aspirasi bersama mereka, yaitu peningkatan rakyat Timor menuju kesejahteraan dan kemerdekaan.¹⁰⁵

196. Untuk bertahan di posisi ini, Prancis abstain dari mendukung Resolusi Sidang Umum pertama, yang disetujui menyusul invasi Indonesia, karena resolusi tersebut tidak seimbang dan menyalahkan Indonesia sepenuhnya.¹⁰⁶ Pemerintah Prancis tetap abstain pada semua resolusi Sidang Umum berikutnya dengan menyatakan bahwa resolusi-resolusi tersebut “mengabaikan realitas situasi di Timor-Leste”.¹⁰⁷ Pada 1979, Pemerintah Giscard d’Estaing menandatangani perjanjian pajak dengan Indonesia. Dalam pandangan Pemerintah Australia, ini mengimplikasikan pengakuan *de jure* bagi kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste karena perjanjian tersebut ditandatangani setelah penggabungan 1976, dan memiliki klausa yang mendefinisikan Indonesia sebagai wilayah yang ditentukan oleh hukum Indonesia.¹⁰⁸

197. Peralatan militer yang disediakan bagi Indonesia oleh Pemerintah Giscard d’Estaing digunakan di Timor-Leste, termasuk tank dan helikopter Puma dan Allouette. Helikopter Puma diproduksi di Indonesia pada 1979. Tambahan Allouette disediakan oleh Prancis pada 1982. Pihak Resistansi Timor mengklaim bahwa peralatan ini digunakan dalam pertempuran. José Ramos-Horta menulis:

‘Allouette’ adalah sesuatu yang sangat ditakuti Fretilin. Kecerbagunaan dan kecepatannya memungkinkan pengoperasian efektif di daerah-daerah hutan dan pergunungan untuk mengejar pasukan-pasukan gerilya yang sedang mundur, atau memaksa mereka keluar dari basis-basis mereka.¹⁰⁹

198. Pada Januari 1978, Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta mengonfirmasi adanya helikopter-helikopter Puma di Dili, tetapi yakin bahwa helikopter tersebut tidak dipersenjatai.

Angkatan Darat dan Udara saat ini mengoperasikan sekitar sepuluh helikopter ringan (BO-105, Puma, dan Allouette), yang berbasis di Dili. Dari apa yang kami lihat, helikopter-helikopter tersebut hanya

digunakan untuk kegiatan pengintaian dan evakuasi terbatas. Tidak ada yang tampak dibekali peralatan sebagai pesawat bersenjata.’

199. Pihak Resistansi Timor-Leste dan organisasi-organisasi masyarakat sipil Prancis berharap bahwa Prancis akan mendukung Timor-Leste di PBB, setelah Francois Mitterand menjadi presiden sosialis pertama negara itu pada 1981. Ketika dalam oposisi, pihak sosialis selalu bersemangat mengkritik kebijakan pemerintah konservatif Giscard d’Estaing (1974 - 1981) dalam isu tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima secara moral, dan Mitterand menyebut rakyat Timor sebagai rakyat yang “ditinggalkan, korban-korban dari kekuatan-kekuatan yang akan menghapus mereka”.¹¹⁰ Mitterand menjadi presiden sejak 1981 sampai 1995 dan, menurut Konstitusi Prancis, memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri. Pada Desember 1981, ia memberitahu televisi Portugis bahwa rakyat Timor-Leste sedang mengalami “penindasan yang sangat keras... bahwa tidak dapat diterima bila pihak yang kuat menghancurkan yang lemah dan melakukan eliminasi-eliminasi fisik yang dapat mengakibatkan pemunahan rakyat” dan bahwa “jika PBB tidak mengambil inisiatif untuk membela hak-hak Timor, Prancis akan menjalankan kewajiban tersebut.”¹¹¹

200. Pada praktiknya, Prancis di bawah pemerintahan Mitterand melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya dan bahkan abstain dari mendukung Resolusi Sidang Umum 1982, yang hanya mengimbau Sekretaris Jenderal untuk mencoba mencari solusi melalui dialog. Pada 1983 Pemerintah Prancis secara resmi memberitahu Portugal bahwa mereka akan menentang pengambilan suara tahun itu jika isu tersebut timbul.¹¹² Menjawab pertanyaan tentang hak asasi manusia di Timor-Leste pada 1986, Menteri Luar Negeri, Roland Dumas, berkata bahwa informasi tentang masalah tersebut tidak lengkap dan kontradiktif, dan bahwa pada 1982 sebagian besar rakyat Timor Timur telah memilih Partai Golkar Soeharto. Prancis secara singkat menyebut Timor dalam debat tentang penentuan nasib sendiri di Komisi hak asasi manusia PBB pada Januari 1987. Para aktivis Timor-Leste memasuki dan meminta suaka di Kedutaan Prancis di Jakarta tiga kali pada 1995-1996; permintaan-permintaan mereka untuk pergi ke Portugal telah dihormati.

201. Prancis merupakan donor besar bagi Indonesia selama periode Soeharto. Pada 1991, Prancis adalah donor bilateral terbesar kedua, dan mempertahankan dukungannya selama krisis ekonomi Asia sejak 1997. Berlawanan dengan sebagian dugaan, Prancis meningkatkan kerjasama militernya dengan Indonesia di bawah Presiden Francois Mitterand. Pembelian-pembelian Indonesia pada 1990-an mencakup meriam dan kendaraan pengintai amfibi. Sejak 1994, didorong oleh strategi agresif antara bisnis dan pemerintah, untuk pertama kalinya penjualan Prancis di Asia melampaui pasar-pasar tradisional seperti Timur Tengah, dan perusahaan-perusahaan grup Thompson, contohnya, menyediakan berbagai peralatan militer

* Laporan oleh Duta Besar Roger Peren dan Col MacFarlane, Atase Pertahanan, 13 Januari 1978. *New Zealand Documents on East Timor*, Vol. 1. MacFarlane adalah atase pertahanan Barat pertama yang diperbolehkan mengunjungi Timor-Leste setelah invasi.

dan komunikasi bagi Indonesia. Kerjasama juga mencakup pertukaran personel militer. Pada 1997, Prancis menganugerahkan bintang penghargaan kepada BJ Habibie untuk perannya dalam mempromosikan hubungan Prancis-Indonesia dan pembangunan industri di Indonesia.

202. Prancis campurtangan dalam isu Timor-Leste pertama kalinya pada 1999. Di bawah Presiden Jacques Chirac, Prancis mendukung proses penentuan nasib sendiri seiring dengan pernyataan-pernyataan kebijakan sebelumnya, dan merupakan satu dari 22 negara yang berkontribusi pada International Force for East Timor (Interfet), khususnya untuk meningkatkan kapabilitasnya di udara dan di air.

Rusia (USSR)

203. Bekas Uni Soviet (USSR),^{*} yang menurut pengakuannya sendiri merupakan teman rakyat kolonial, adalah negara adikuasa dan anggota tetap Dewan Keamanan. Indonesia dan pihak Barat khawatir Uni Soviet akan campurtangan dalam Timor-Leste dan memonitor aktivitasnya secara dekat. Pada kenyataannya, Rusia memainkan peran kecil dan, seperti negara adikuasa lainnya, melakukan pendekatan pragmatis berdasarkan kepentingan strategisnya di Indonesia.

204. Menyusul Revolusi Bolshevik 1917, Uni Soviet mempromosikan dirinya sebagai jawara rakyat kolonial dan pergerakan revolusioner. Aktivitas ini meningkat setelah Perang Dunia Kedua dan jatuhnya kerajaan-kerajaan Eropa, dan memuncak pada 1970-an dengan, antara lain, intervensi Soviet di Angola pada 1975, Perang Ogaden (1976-78),[†] dan invasi gagal di Afghanistan (1979 - 1989).

205. Pada 1960, Uni Soviet mengusulkan dan membuat naskah asli deklarasi bersejarah PBB tentang Pemberian Kemerdekaan pada Negara dan Bangsa Jajahan. Naskah tersebut banyak dimodifikasi, tapi inisiatif ini merupakan kontribusi penting pada dekolonisasi, termasuk bagi Timor-Leste. Uni Soviet mendukung dua Resolusi Dewan Keamanan tentang Timor-Leste yang diambil sebagai tanggapan terhadap invasi Indonesia, dan semua Resolusi Sidang Umum tentang masalah tersebut antara 1975 dan 1982.

206. Ketertarikan Soviet pada Timor tidak sekuat yang sebelumnya ditunjukkan pola pemilihan ini, atau seperti yang diantisipasi oleh sebagian pihak. Dalam konteks Perang Dingin yang seru, dan menyusul jatuhnya Vietnam ke tangan Viet Cong, ketakutan dirasakan oleh banyak pihak, termasuk Indonesia dan Timor-Leste, bahwa Soviet mungkin akan campurtangan dan membentuk “Kuba Asia” di Timor-Leste, mungkin bahkan dengan peluru-peluru kendali yang disediakan Soviet yang mengincar Jakarta. Utusan PBB, Jamsheed Marker, pernah menyebut suatu “pandangan persisten” bahwa Pemerintah Amerika Serikat mendorong Soeharto

^{*} Uni Soviet pecah pada 1991 ketika limabelas negara anggotanya merdeka. Sekarang Uni Soviet dikenal sebagai Federasi Rusia, atau Rusia.

[†] Somalia dan Ethiopia berperang untuk menguasai wilayah Ogaden milik Ethiopia. Uni Soviet awalnya mendukung Somalia kemudian pindah mendukung Ethiopia.

untuk campurtangan di Timor guna mencegah kemungkinan tersebut. Menurut skenario ini, seperti diamati oleh Marker, “pengambilalihan Dili akan menambah fasilitas Soviet yang sudah ada di Teluk Cam Ranh, dan memberi alasan Moskow untuk menghadirkan angkatan lautnya yang sangat strategis di wilayah tersebut”.

207. Komisi tidak berhasil mengakses arsip-arsip Rusia, sehingga sulit menentukan kebenaran dari kepercayaan dramatis tapi penting ini.[†] Bukti yang ada memberi kesan kuat bahwa klaim-klaim ini sering termotivasi secara politik di sisi Indonesia dan tidak memiliki dasar realitas, karena Uni Soviet lebih tertarik pada hubungannya dengan Indonesia dibandingkan dengan nasib Timor-Leste.

208. Pemerintah-pemerintah yang mendukung Indonesia menyangkal klaim-klaim tersebut. Dalam sebuah laporan pada 8 Oktober 1975, atase pertahanan Selandia Baru di Jakarta, Kolonel AG Armstrong, menulis:

Pihak Indonesia mengklaim pada beberapa kesempatan bahwa Fretilin menerima bantuan dari luar, tapi mereka tidak pernah bisa memberikan bukti nyata.

209. Laporan Armstrong menyebut klaim Angkatan Laut TNI (TNI-AL) yang telah menemukan “kapal selam milik Cina Merah berlayar di sekitar kota Dili”, dan bahwa identitasnya sebagai sebuah kapal selam buatan Rusia, yang saat itu digunakan oleh Cina, dikonfirmasi melalui “tanda” yang terdapat pada mesin-mesinnya. Kolonel tersebut melaporkan bahwa informannya meragukan Angkatan Laut Indonesia “mampu mengidentifikasi kelas kapal selam dari suara mesinnya” dan bahwa dari nama pembuat kapal yang dimaksud berarti pembuatannya setelah perpisahan Sino-Soviet. Ia menyimpulkan:

Sebuah kapal selam mungkin saja telah terlihat, tapi identifikasi positifnya sebagai milik Cina, Rusia, atau apapun harus diragukan.¹¹³

210. Pejabat-pejabat Australia juga meragukan kebenaran mengenai tujuan pihak komunis terhadap Timor. Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, secara pribadi memberitahu Presiden Soeharto pada beberapa kesempatan bahwa pernyataan itu tidak berdasar. Departemen Luar Negeri memperkirakan dengan tepat pada November 1974 bahwa Uni Soviet tidak akan “menaruh ambisi di situ, karena ... alasan bahwa hal ini dapat merusak apa yang harus dinilai oleh Moskow sebagai hubungan yang lebih penting dengan Indonesia.”¹¹⁴

.....
* *East Timor: A Memoir of the Negotiations for Independence*, McFarland, 2003, hal. 9. Uni Soviet menyediakan bantuan militer bagi Vietnam Utara dalam perangnya dengan Vietnam Selatan dan AS, dan sesudah kemenangan Vietnam Utara pada 1975 menjadi donor bantuan militer dan ekonomi terbesar bagi Vietnam. Berdasarkan perjanjian pada 1978, Vietnam memberikan kepada Uni Soviet akses ke fasilitas-fasilitas di Da Nang dan Cam Ranh Bay, sehingga secara signifikan meningkatkan kehadiran angkatan laut Soviet di wilayah tersebut yang sampai saat itu hanya terbatas pada Soviet Timur-Jauh.

† Satu sumber dokumentasi yang mungkin adalah Pusat Penyimpanan Dokumentasi Kontemporer (TKhSD) di Moskow.

211. Sikap Soviet terhadap Timor-Leste digambarkan dengan baik dalam cerita di bawah ini, yang dikemukakan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Woolcott:

Saya ingat pernah bertanya kepada duta besar Soviet bagaimana reaksi Uni Soviet jika Indonesia tergerak menggabungkan Timor-Leste. Kami memainkan semacam sandiwara. Mengajak saya melihat peta Indonesia di dinding kantornya, dia bertanya: “Timor-Leste di mana?” Memainkan peran saya, sayapun menunjukkannya pada peta. “Sangat kecil dan dikelilingi oleh Indonesia, bukan?”, dia berkata, dan kemudian mengalihkan topik pembicaraan.¹¹⁵

212. Woolcott menguraikan bahwa cerita itu mengungkap sisi buruk kekuasaan yang besar, dan menyatakan bahwa USSR menyetujui invasi India di Goa pada 1961.

213. Pernyataan-pernyataan perwakilan Soviet di PBB mendukung hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, tapi isi pernyataan itu sangat umum dan tidak mengancam Indonesia secara langsung.¹¹⁶ José Ramos-Horta melaporkan bahwa diplomat-diplomat Soviet hanya memberi sedikit dukungan kepada delegasi Fretilin:

Tidak seperti orang Cina yang ramah, orang Rusia tidak pernah mengundang delegasi kami ke Misi mereka untuk pertemuan, apalagi makan.¹¹⁷

214. Menulis pada Februari 1976, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, John Ford, mengomentari sikap Rusia:

Hal ini sudah bernada *pianissimo*, dan saya mempunyai kesan, sejak awal Rusia sudah memutuskan bahwa Indonesia akan lolos dengan tindakannya, dan Rusia tidak akan mau membahayakan pengaruhnya yang berkembang di Indonesia. Seandainya Rusia memimpin kelompok pertentangan terhadap Indonesia, mereka mungkin akan diusir, dan kedutaannya yang baru dan luarbiasa indah akan ditinggalkan begitu saja.¹¹⁸

215. Moskow menolak permohonan yang diajukan berkali-kali oleh perwakilan Fretilin untuk mengunjungi USSR. Mereka tidak memberikan visa sampai pada 1985, sepuluh tahun setelah terjadinya invasi, dan kemudian hanya untuk mengambil bagian dalam acara-acara budaya.

216. Uni Soviet dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik pada 1953. Uni Soviet menyokong Indonesia dalam perselisihan mengenai Irian Barat dan mulai 1960 Indonesia adalah penerima nonkomunis terbesar untuk bantuan militer dari blok Soviet. Hubungan tersebut selamat dari penindasan politik terhadap sayap kiri oleh pasukan-pasukan Soeharto pada 1965, dan, meskipun ada pertentangan-pertentangan ideologi, kedua pihak melihat keuntungan bersama dalam kelanjutannya. Uni Soviet sangat menghargai kegunaan strategis hasil hubungan itu, dan berusaha agar hubungannya dapat memperkecil pengaruh AS dan Cina di Asia Tenggara. Dalam

perang dinginnya dengan Amerika Serikat, Moskow menghargai sikap Indonesia yang, tak seperti Korea Selatan dan Filipina, tidak menjadi tuan rumah bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat, dan memperkenankan kapal selam nuklir Soviet melewati lautan Nusantara. Hubungan itu juga mengimbangi peningkatan pengaruh regional Cina yang mengancam kepentingan kedua negara dengan beberapa cara yang berbeda.

217. Selain mempertahankan dukungannya terhadap penentuan nasib sendiri pada nada pianissimo, Uni Soviet melunakkan posisinya mengenai isu Timor-Leste pada 1979 sebagai imbalan atas dukungan Indonesia terhadap penggantian Khmer Merah yang pro-Cina dengan pemerintahan pro-Soviet Heng Samrin sebagai perwakilan Kamboja di PBB. Soviet juga mengatakan bahwa pemerintah Soeharto melakukan pembayaran kembali sebanyak USD2 miliar dari periode Sukarno, dengan syarat Soviet menerima kedaulatan Indonesia di Timor.¹¹⁹

218. Kebijakan luar negeri Soviet berubah haluan ketika Mikhail Gorbachev diangkat menjadi presiden pada Maret 1985. Ia lebih menekankan penyelesaian konflik melalui negosiasi daripada kekuatan, yang dengan demikian seharusnya lebih berpihak pada Timor-Leste. Tetapi karena jauhnya Timor dari fokus Uni Soviet, dan pentingnya hubungan dengan Indonesia, Soviet justru menentang kebijakannya sendiri. Presiden Soeharto berkunjung ke Moskow pada September 1989 dan Indonesia meringankan larangan-larangan terhadap perdagangannya dengan Soviet, dan kunjungan ke Soviet itu menghasilkan kemajuan ekonomi yang lebih kuat.

219. Pecahnya Uni Soviet pada 1991, dan pembebasan “negara-negara tahanan”-nya, merupakan sumber inspirasi bagi Resistansi Timor-Leste. Dorongan semangat juang tidak datang dari keinginan untuk melihat disintegrasi Indonesia, tetapi karena hal ini mendemonstrasikan bahwa *status quo* dapat diubah bahkan ketika ada kekuatan besar yang terlibat. Hal ini sangat berarti bagi peningkatan semangat rakyat Timor yang telah menjadi sasaran indoktrinasi dari semua pihak bahwa penentuan nasib sendiri bagi rakyat kecil adalah sia-sia. Dalam pidato-pidato ketika itu yang menitikberatkan bahwa tidak ada yang tidak dapat diubah, José Ramos-Horta sering bercerita tentang kosmonot Soviet yang kepulangannya ke Bumi harus ditunda karena tempat pendaratan yang telah ditunjukkan oleh bagian kontrol misi tidak lagi menjadi bagian Uni Soviet.

220. Dukungan Rusia atas Jajak Pendapat 1999 yang diatur oleh PBB serta dukungan terhadap Interfet terkesan sangat kritis mengingat wewenang vetonya dalam Dewan Keamanan. Dukungan ini diberikan agar memungkinkan Timor-Leste menjalankan hak atas penentuan nasib sendiri, yang telah diperjuangkan sejak beberapa dekade yang lalu oleh Uni Soviet.

* Indonesia menyatakan dalam sebuah publikasi pada 1980 bahwa: “Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu memisahkan bangsa Timor Timur dari Indonesia.” Departemen Penerangan Republik Indonesia, *The Province of East Timor: Development in Progress*, hal. 8.

Inggris

221. Inggris adalah Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB dan sekutu dekat Portugal dan Indonesia, berdasarkan sejarah panjang hubungan dengan bangsa-bangsa ini sejak beberapa ratus tahun lalu. Namun selanjutnya pemerintah Inggris menunjukkan perhatian yang terbatas saja atas isu Timor-Leste, selama hampir 40 tahun sejarah dekolonisasi wilayah ini.

222. Aliansi Inggris dan Portugal berlangsung selama 600 tahun, dan Inggris tidak aktif mempertanyakan kegagalan rezim Salazar untuk membangun atau mendekolonisasi Timor Portugis berdasarkan Piagam PBB. Inggris menyatakan abstain ketika Sidang Umum PBB mengesahkan deklarasi tentang dekolonisasi dan menggolongkan Timor sebagai wilayah tak berpemerintahan sendiri pada 1960. Inggris juga menyatakan abstain pada 1964, ketika Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi mengecam Portugal karena lalai menjalankan resolusi-resolusi Sidang Umum dan Dewan Keamanan sejak tiga tahun sebelumnya.¹²⁰

223. Menyusul keputusan dekolonisasi Portugal pada 1974, para pejabat Kedutaan Besar Inggris di Jakarta melaporkan perkembangan-perkembangan kepada pemerintah di London. Seorang pejabat kedutaan mengunjungi wilayah ini pada Juli 1975, dan berdasarkan laporannya, Duta Besar Inggris, John Archibald Ford, membuat rekomendasi berikut bagi Foreign and Commonwealth Office (FCO) di London:

Meskipun tanpa intervensi dari Uni Soviet atau Cina, wilayah tersebut berpotensi menjadi semakin sulit diatur, dan argumentasi untuk penggabungannya dengan Indonesia semakin kuat...Tentu saja bila dipandang dari segi ini, adalah menguntungkan bagi Inggris apabila wilayah Timor diserap ke dalam wilayah Indonesia secepat dan setenang mungkin. Dan apabila masalah ini memuncak dan dipermasalahakan di PBB, sebaiknya kita diam-diam saja dan menghindari melawan pemerintah Indonesia.*

224. Kedutaan Besar Australia memperkuat pendekatan Inggris. Dalam surat rahasia ke Canberra tertanggal 21 Juli 1975, seorang pejabat menulis:

Pandangan Kedutaan Besar Inggris...menarik...Mereka tahu apa yang pasti akan terjadi, dan mereka menempatkan kepentingan jangka panjang mereka di Indonesia. Mereka ingin berada pada jarak kejauhan yang nyaman.¹²¹

225. Pada Oktober, Australia memastikan kepada pemerintah Inggris bahwa Presiden Soeharto telah memutuskan intervensi militer. Duta Besar Ford melaporkan hal ini ke London:

* 21 Juli 1975, dikutip oleh Duta Besar Australia, Richard Woolcott. Brian Toohey dan Marian Wilkinson di *The Book of Leaks*, Angus and Robertson, London, 1987, hal. 176. Ford adalah duta besar Inggris ke Indonesia 1975-1978.

Kedutaan Besar Australia kini telah memastikan (tetapi meminta kita tidak membalas komunikasi ini ke mereka di Canberra atau memberi tahu yang lain) bahwa Presiden Soeharto telah mengesahkan operasi klandestin (termasuk penggunaan kapal dan pesawat terbang) ... Tujuannya adalah pengepungan total Dili sebelum 15 November.¹²²

226. Suratnya diakhiri dengan rekomendasi lebih lanjut tentang ketakterlibatan:

Duta Besar Amerika Serikat saat santap malam dengan Sir Michael Palliser pada 21 Oktober berkata bahwa Timor ada pada urutan tinggi dalam daftar Kissinger mengenai tempat-tempat di mana AS tidak ingin berkomentar atau terlibat. Saya yakin kita harus terus mengikuti sikap Amerika.¹²³

227. Rekomendasinya diterima oleh Menteri Luar Negeri Pemerintahan Partai Buruh, James Callaghan.*

228. Pemerintah Inggris tidak melakukan tindakan atas kematian wartawan Malcolm Rennie dan *cameraman* Brian Peters dari stasiun televisi Nine Network, keduanya warga negara Inggris, di Balibó pada 16 Oktober 1975.¹²⁴ Pada 24 Oktober Duta Besar Ford menginformasikan ke pemerintah Inggris bahwa:

Kami mengerti bahwa para wartawan terbunuh, hampir pasti karena mereka kurang berhati-hati, selama serangan oleh pasukan Indonesia/UDT, dan bahwa jasad mereka dibuang oleh komandan setempat, mungkin dibakar ... Karena tidak ada protes apapun yang mampu mengembalikan jenazah para wartawan tersebut, saya sarankan agar kita menghindari tuntutan kepada pihak Indonesia. Mereka berada di dalam zona perang atas pilihan mereka sendiri.¹²⁵

229. Kebijakan Inggris menanggapi pengambilan paksa Timor Portugis oleh Indonesia dilaporkan ke Canberra oleh Komisi Tinggi Australia (Australian High Commission) di London:

Male (*Deputy Under-Secretary*, FCO) hari ini mengatakan bahwa seandainya Indonesia mengambil Timor dengan menggunakan kekerasan, pemerintah Inggris sebaiknya bertahan dari tekanan yang tentu saja akan berkembang dengan pesat di sini, untuk bukan sekadar mengutuk Indonesia secara lisan, tetapi juga untuk mengambil tindakan lebih drastis seperti menghentikan semua bantuan. Untuk menanggulangi tekanan tersebut, pemerintah Inggris perlu mengeluarkan pernyataan dengan cepat pada waktunya untuk (a) menekankan sikap kesabaran dan ketabahan di pihak

* Callaghan adalah Sekretaris Departemen Luar Negeri pada 1975 - 1976, lalu Perdana Menteri pada 1976 - 1979

Indonesia dalam menghadapi masalah ini, (b) menyangkal bahwa isu Timor, meskipun secara marginal, merupakan masalah Inggris, dan (c) mengatakan bahwa negara-negara di wilayah yang memiliki alasan yang kuat untuk memperhatikan Timor, tidak merasa terlalu terganggu oleh perkembangan situasi.¹²⁶

230. Keputusan Inggris untuk tetap “bersikap *low profile*” sebagian besar didikte oleh kepentingan yang dikaitkannya pada kepentingan perdagangan jangka panjang di Indonesia. Hal ini mengacu kembali ke abad ke-17 dan ke-18, ketika English East India Company bersaing dengan VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) untuk menguasai perdagangan rempah di kepulauan ini. Pada awal abad ke-20, investasi Inggris di Hindia Belanda berada di urutan kedua setelah Belanda. Inggris memimpin Pos Komando Sekutu di wilayah ini selama Perang Dunia Kedua, mengembalikan pemerintahan kolonial Belanda di Jawa, kemudian membantu mediasi antara Belanda dan Indonesia sebelum kemerdekaan. Hubungan memburuk pada awal 1960-an ketika Sukarno menentang rencana Inggris untuk Singapura dan Malaysia. Soeharto segera mengakhiri kebijakan konfrontasi Sukarno, dan memperbaiki hubungan politik dengan menerima kunjungan Ratu Elizabeth II pada 1974. Deregulasi pada 1980-an memungkinkan masuknya banyak perusahaan terbesar Inggris, dan Inggris sekali lagi menjadi investor kedua terbesar di Indonesia.¹²⁷

231. Kepada pemerintahan Inggris di London, Duta Besar Ford memberitahukan pandangannya bahwa tindakan Indonesia dibenarkan atas dasar keamanan. Dalam memo rahasia setelah invasi tersebut, ia menulis:

Dugaan saya adalah apabila Indonesia mengizinkan Fretilin mendirikan pemerintahan yang bermusuhan di Timor-Leste, dan menjadikan Timor-Leste sebagai rumah bagi para pembangkang dari Maluku dan pulau-pulau bagian luar lainnya, hal ini akan jauh lebih merugikan. Saya kira Indonesia sebenarnya membeli keamanan dengan harga yang pantas, meskipun sebenarnya dapat memperolehnya dengan cara yang lebih murah apabila Indonesia lebih efisien.¹²⁸

232. Pada Februari 1976, bertentangan dengan Menteri Inggris, Lord Goronwy-Roberts, Departemen Luar Negeri mengusulkan pertemuan dengan José Ramos-Horta:

Adalah kebijakan Kerajaan Inggris untuk sedapat mungkin menghindari keterlibatan dalam isu Timor. Peranan kami di PBB terutama untuk menegaskan kembali dukungan kami terhadap prinsip penentuan nasib sendiri. Pada akhir November, kami memutuskan untuk tidak mengakui Deklarasi Kemerdekaan Fretilin. Menerima kunjungan Ramos-Horta berarti (a) Inggris menunjukkan perhatian yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya; (b) memberi semacam pengakuan pada eksistensi “pemerintahan” Fretilin yang

lebih tinggi daripada sebelumnya; (c) akan berpotensi merusak hubungan kami dengan Indonesia—hubungan yang telah cukup tegang karena dukungan kami terhadap resolusi Dewan Keamanan yang baru-baru ini.¹²⁹

233. Pada waktu yang sama, para wakil Inggris mendukung aspek-aspek kampanye Indonesia, dengan cara mengadakan pertemuan dengan dan memberi saran kepada para pejabat Indonesia tentang penanganan persoalan ini. Duta Besar Ford melaporkan pada Januari 1976:

Saya memberitahu mereka [para pejabat Indonesia] bahwa kami telah melakukan yang terbaik untuk Indonesia di PBB dan saya yakin kami telah berhasil mengatur meredakan pembicaraan tentang persoalan Timor di New York.¹³⁰

234. Berita kawat tersebut berlanjut dengan melaporkan saran Duta Besar tentang bagaimana menangani laporan-laporan kekejaman yang muncul akibat invasi Indonesia. Berita-berita kawat lainnya mengecam tindakan tak pantas dan kaku yang dilakukan Indonesia, bukan berdasarkan keprihatinan terhadap Timor, tetapi karena inkompetensi semacam itulah yang membuat Inggris dan negara-negara lain lebih sulit membela Indonesia.

235. Berdasarkan kebijakan *low-profile*-nya, pemerintah Inggris bersikap abstain terhadap semua resolusi Sidang Umum mengenai masalah Timor-Leste antara 1975 dan 1982. Inggris mendukung Resolusi 384 (1975) dan 389 (1976) Dewan Keamanan PBB, yang mengakui hak penentuan nasib sendiri Timor-Leste dan meminta Indonesia menarik pasukannya. Pada 22 April 1976, wakil Inggris, Murray, memberitahu Dewan Keamanan bahwa Inggris menyatakan setuju terhadap Resolusi 389 “karena kami sangat menganggap penting prinsip penentuan nasib sendiri.”¹³¹ Ia juga menyatakan bahwa Inggris tidak menganggap tindakan penentuan nasib sendiri telah dilakukan di Timor-Leste, karena tidak terpenuhinya tiga syarat penting: perdamaian dan ketertiban, ketiadaan tekanan dari pasukan asing, dan tata cara yang tepat.

236. Sejalan dengan kebijakan ini, Inggris tidak mengakui “tindakan penentuan nasib sendiri” yang diatur Indonesia dan dilaksanakan oleh Majelis Rakyat Timor Timur di Dili pada 31 Mei 1976. Kemungkinan diundang ke Dili untuk menghadiri acara tersebut menimbulkan kekhawatiran yang amat sangat di antara para diplomat negara-negara Barat di Jakarta, yang enggan mengakui apa yang mereka ketahui sebagai proses palsu. Seorang pejabat dari Foreign Office menulis:

Tujuan Indonesia adalah untuk memperoleh tampilan yang tampak terhormat atas pengambilalihan Timor Timur secara cepat, dengan cara mengaitkan pihak asing yang terkemuka pada “tindakan pilihan”.¹³²

237. Agar tidak mengecewakan pemerintah Indonesia, Duta Besar Ford memilih memberitahu para pejabat mereka bahwa ia ada acara lain hari itu. Ketika pemerintah Indonesia mengirim undangan lain yang meminta peransertanya dalam suatu misi untuk mengesahkan dukungan rakyat bagi petisi integrasi tersebut, Sekretaris Departemen Luar Negeri Inggris, Anthony Crosland, menambahkan alasan lain untuk menjauhkan Inggris dari hubungan apapun dengan proses tersebut:

Karena alasan-alasan yang berhubungan dengan kepentingan kita di Kepulauan Falkland, Belize, dan Gibraltar, kita menganggap penting mempertahankan prinsip keterlibatan PBB dalam penegakan penentuan nasib sendiri. Kami sangat terdorong, karenanya, untuk meminta Anda menolak undangan tersebut.¹³³

238. Pemerintah Inggris menegaskan kembali pengakuannya atas hak penentuan nasib sendiri Timor dalam beberapa kesempatan. Dalam pernyataannya kepada Komite Keempat Sidang Umum pada 1982, wakil Inggris menegaskan dukungan pemerintahnya bagi prinsip tersebut, dan kemudian menyatakan bahwa Portugal dan Indonesia “sendiri dapat menyelesaikan permasalahan ini” dan bahwa Inggris, sebagai teman kedua negara tersebut, berharap hal ini dapat dilaksanakan sesuai kehendak rakyat Timor-Leste.¹³⁴ Pada 1992, Pemerintah Inggris mengulangi komitmen ini dalam konteks usaha Sekretaris Jenderal PBB untuk penyelesaian masalah ini. Baroness Trumpington mengatakan kepada House of Lords 16 Juli 1992:

*Kerajaan Inggris belum mengakui aneksasi atas Timor-Leste, begitu pula masyarakatnya. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia telah mengakuinya. Kami sangat yakin bahwa masa depan Timor-Leste paling baik diselesaikan melalui hubungan bilateral antara pihak-pihak yang terlibat langsung, yaitu Portugal dan Indonesia. Usaha-usaha Sekretaris Jenderal PBB untuk mempertemukan mereka dengan tujuan mencapai penyelesaian, pantas menerima dan mendapat dukungan kita.*¹³⁵

239. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah Inggris memisahkan masalah Timor dari hubungan bilateralnya dengan Indonesia, sambil tetap membiarkan terbukanya kemungkinan penentuan nasib sendiri, bilamana timbul kesempatan. Inggris mempertahankan bantuan penting dan program kerjasama militer dengan Indonesia selama pendudukan Indonesia atas Timor-Leste. Pemerintah Inggris mengungkapkan kepeduliannya atas pelanggaran hak-hak asasi manusia di Timor-Leste, antara lain pada waktu pembantaian Santa Cruz pada 1991, tapi berpendapat bahwa dialog akan menghasilkan lebih daripada sekadar mengambil “langkah-langkah mudah, seperti menghapus bantuan.”¹³⁶ Seruan untuk memasukkan situasi hak asasi manusia di Indonesia dan Timor-Leste dalam agenda konsorsium bantuan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), ditolak.

240. Indonesia hanya memiliki industri senjata yang kecil dan harus mengimpor sebagian besar peralatan militernya. Inggris menjadi pemasok utama senjata

selama pendudukan Timor-Leste, dan dalam periode 1994 - 2004 sebagian besar peralatan militer Indonesia datang dari Inggris.¹³⁷ Sebagian besar perdagangan ini dilaksanakan setelah perlombaan senjata internasional yang berkaitan dengan Perang Dingin berakhir. Pemerintah Inggris menyetujui izin ekspor bagi perusahaan-perusahaan Inggris untuk menjual macam-macam senjata ke Indonesia, antara lain pesawat tempur dan kapal perang, kendaraan bersenjata, senapan kaliber besar dan kecil, amunisi, bom, roket, misil, sarana pengendali kerusakan, dan peralatan untuk pelatihan militer. Para pejabat senior militer Indonesia juga dilatih di lembaga-lembaga militer Inggris.

241. Pemerintah Inggris mempertahankan hubungan militer dengan Indonesia. Baroness Trumpington of Sandwich mengatakan kepada House of Lords pada 1992 bahwa Indonesia berhak mempertahankan kemerdekaannya; bahwa pelatihan militer oleh Inggris meningkatkan penghormatan bagi demokrasi dan hak-hak asasi manusia; dan bahwa pengajuan izin ekspor peralatan militer akan ditolak, apabila diduga peralatan militer tersebut digunakan untuk tindakan represi. Baroness Trumpington of Sandwich menyatakan:

*Kami tidak percaya bahwa peralatan militer Inggris yang pernah dijual kepada Indonesia telah dipakai untuk melawan rakyat Timor-Leste.*¹³⁸

242. Atase Militer Kedutaan Besar Indonesia di London mengakui pada 1999, bahwa kendaraan bersenjata Saracen dan Saladin buatan Inggris digunakan di Timor-Leste. Kelompok Resistansi Timor menyatakan bahwa pasukan Indonesia juga menggunakan pesawat penyerang Hawk yang dipasok Inggris, khususnya pada puncak peperangan pada 1978-1979. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menyatakan kepada Komisi pada Juli 2003, bahwa delapan pesawat Hawk dipasok kepada Indonesia pada 1978; tetapi pihak kedutaan mengatakan bahwa pesawat-pesawat tersebut adalah model-model yang lebih tua, yang hanya sesuai untuk pelatihan bukannya pertempuran udara ke darat. Baik pemerintah Inggris maupun British Aerospace (BAe) menyangkal penggunaan pesawat-pesawat tersebut untuk kegiatan militer membasmi kelompok Resistansi.[†] Masalah ini menimbulkan kontroversi di Inggris, khususnya setelah pemerintah Inggris mengizinkan penjualan lebih lanjut pada tahun 1990-an. (Lihat segmen 7.6.2 dalam bab ini mengenai masyarakat sipil internasional).

* 29 Januari 1999. Mark Thomas Show, Channel 4. Hendro Subroto melaporkan bahwa panserintai Ferret Mk.2, kendaraan pengangkut pasukan VF 603 Saracen, dan kendaraan VF 601 Saladin (lengkap dengan senapan 76 mm) digunakan pada invasi Indonesia 1975. *Eyewitness to Integration of East Timor*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

† Pada Desember 1995, Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta melaporkan tuduhan bahwa pesawat tempur Hawks digunakan untuk serangan pengeboman terhadap Fretilin pada awal 1995. Atase Militer Inggris dan teknisi yang membantu merawat pesawat tersebut memeriksa buku catatan (log book) mencari bukti bahwa terjadinya pengeboman tetapi hasilnya negatif. Selandia Baru, OIA Material, Volume 4, 13 Desember 1995.

243. Apakah peralatan militer buatan Inggris digunakan dalam pelanggaran tertentu di Timor-Leste atau tidak, pemberian bantuan militer ini membantu Indonesia meningkatkan kemampuan militernya dan memberikan kesempatan bagi pasukan bersenjata Indonesia untuk menggunakan peralatan lain di Timor-Leste. Lebih penting lagi, kebijakan bantuan militer bagi Indonesia oleh kekuatan Barat utama dan anggota Dewan Keamanan, menjadi tanda dukungan politik yang mendasar bagi pihak penyerang dalam konflik ini, dan menyakitkan serta membingungkan orang Timor yang mengetahui dukungan yang diutarakan Inggris bagi penentuan nasib sendiri. Pada Mei 1976, Duta Besar Inggris untuk Jakarta saat itu, John Ford, berpendapat bahwa Timor-Leste terlalu terbelakang untuk tindakan penentuan nasib sendiri gaya Barat. Masyarakat Timor-Leste berhak mempertanyakan apa yang begitu beradab dari Inggris dalam dukungannya terhadap agresi Indonesia, baik secara langsung atau tidak langsung.¹³⁹

244. Di bawah kepemimpinan Sekretaris Departemen Luar Negeri, Robin Cook, pemerintahan Partai Buruh Inggris sedikit memperbaiki tindakannya, dengan mendukung secara aktif perundingan yang mencapai puncaknya pada tindakan penentuan nasib sendiri Timor-Leste pada Agustus 1999. Jamsheed Marker, Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal untuk Timor-Leste, menyampaikan penghargaan kepada Duta Besar Inggris untuk PBB, Stewart Eldon, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Robin Christopher, atas kontribusi mereka bagi kelompok inti negaranegara yang bekerjasama dengan proses PBB. Duta Besar Christopher menampung Xanana Gusmão di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta setelah ia dibebaskan dari tahanan pada September 1999. Baik sebagai Sekretaris Departemen Luar Negeri Inggris maupun sebagai wakil Uni Eropa, Robin Cook berperan dalam keputusan yang diambil pada pertemuan APEC di Auckland pada 9 September 1999, tentang mendesaknya keberadaan pasukan internasional untuk mengembalikan ketenteraman di Timor setelah pemungutan suara. Pada 11 September, Jeremy Greenstock, wakil Inggris di Dewan Keamanan, mengunjungi Timor sebagai bagian dari misi Dewan Keamanan yang mendahului pasukan internasional, dan menggambarkan Dili sebagai “neraka di bumi”. Inggris mengikutkan pasukan Gurkha dan mendanai pasukan Interfet.

Amerika Serikat (AS)

245. Amerika Serikat, yang dahulu juga wilayah jajahan, adalah arsitek utama dan salah satu negara pendiri PBB pada 1945 se usai Perang Dunia Kedua, dan anggota tetap Dewan Keamanan serta negara adikuasa. Nama ‘United Nations’ (Perserikatan Bangsa-Bangsa) digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Pendahulunya, Liga Bangsa-Bangsa, didirikan dalam situasi yang serupa setelah Perang Dunia Pertama (1914 - 1918). Berdirinya lembaga tersebut bermula dari reaksi terkejut Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, bahwa suatu peradaban maju dapat terlibat dalam kekejaman dan kehancuran yang ekstrem yang mewarnai perang akbar tersebut. Dalam pidato ‘Empatbelas Butir’-nya yang tersohor pada 1918, Presiden Wilson memaparkan hal-hal yang ia anggap sebagai premis

dasar bagi penyelesaian konflik secara damai. Selain tentang pembentukan suatu perserikatan bangsa-bangsa, di dalamnya juga terkandung rumusan awal mengenai prinsip penentuan nasib sendiri yang kemudian diadopsi dalam Piagam PBB.⁷

246. Amerika Serikat tidak mendukung Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Bangsa Jajahan oleh PBB pada 1960, tetapi kemudian mengubah pendiriannya pada 1961 dan mengakui Timor Portugis sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dengan hak menentukan nasib sendiri.

247. Kebijakan Amerika Serikat semakin berkembang selama masa ini, sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran akan terjadinya pertikaian antara Portugal dengan Indonesia atas wilayah tersebut. Seperti Australia, Amerika Serikat pun khawatir jika penolakan Perdana Menteri Salazar terhadap tuntutan PBB untuk dekolonisasi akan memancing campurtangan Presiden Sukarno atas nama anti-imperialisme. Untuk menghindari terjadinya peperangan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengusulkan agar Amerika Serikat mengajukan masalah tersebut kepada Komite Dekolonisasi PBB, dan menentang segala kemungkinan penggunaan kekuatan oleh Indonesia dengan alasan bahwa kekuatan tidak dapat dibenarkan dalam hal kegagalan dekolonisasi Portugal dan akan merugikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dokumen kebijakan Departemen Luar Negeri 1963 menyatakan:

Satu kegagalan tidak dapat membenarkan kegagalan yang lain... Kita jangan memandang tindakan Indonesia semacam itu sebagai babak kedua dalam sebuah drama yang dimulai dengan Goa dan akan berakhir dengan kematian PBB... Kita tidak dapat membiarkan upaya apapun untuk menguasai wilayah dengan menggunakan kekuatan. Tindakan demikian akan menjadi pelanggaran terhadap berbagai kewajiban dalam Piagam PBB yang telah disetujui oleh Indonesia. Dalam situasi seperti ini, kita harus menentang Indonesia secara diplomatik dan di dalam PBB.¹⁴⁰

248. Departemen Luar Negeri juga mengemukakan pandangan bahwa Timor Portugis tidak mampu menjalankan penentuan nasib sendiri dan harus bergabung dengan Indonesia:

Kita dan Portugis harus mengakui bahwa penentuan nasib sendiri untuk Timor Portugis tidak ada artinya untuk jangka waktu yang tidak menentu ke depan... Secara realistis, hanya satu masa depan yang mungkin bagi wilayah itu, yaitu sebagai bagian dari Indonesia.¹⁴¹

* Butir ke-5 dari pidato *Fourteen Points* Presiden Wilson mengacu kepada klaim kolonial dan perlunya "ketaatan yang kuat terhadap prinsip bahwa dalam menentukan semua masalah kedaulatan semacam itu, berbagai kepentingan dari penduduk setempat juga harus dipikirkan secara seimbang". Butir-butir yang lain mencakup perlunya pengurangan persenjataan oleh negara-negara "sampai pada titik terendah yang memungkinkan bagi keamanan dalam negeri".

Garis-garis besar kebijakan ini tidak sampai perlu dilaksanakan karena pertikaian yang diperkirakan ternyata tidak terjadi. Analisis pesimistis Departemen Luar Negeri AS mengenai terbatasnya pilihan bagi Timor pada waktu itu dapat dipahami, melihat penolakan rezim Salazar mempersiapkan wilayah tersebut untuk merdeka. Namun, ketika isu tersebut kembali mengemuka satu dekade kemudian, pandangan bahwa satu-satunya pilihan bagi Timor adalah berintegrasi dengan Indonesia menjadi—bersama dengan faktor-faktor Perang Dingin—penentu kebijakan dominan yang mengalahkan semua pertimbangan lain. Berbagai rekomendasi lain yang digagas pada 1960-an secara efektif diabaikan sampai berakhirnya Perang Dingin di akhir 1980-an.

249. Gary Gray, mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS, memberikan kesaksian kepada Komisi bahwa kebijakan AS mengenai Timor-Leste sejak 1974 secara signifikan dibentuk oleh situasi global dan regional masa itu, dan oleh keinginan pihak Indonesia dan Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan mereka, karena semakin meluasnya pengaruh komunis di kawasan Indocina. Ia mengatakan:

Seseorang dapat melihat 1975 sebagai puncak kekuasaan komunis di dunia, dan persepsi ancaman bagi Amerika Serikat dan ancaman bagi apa yang pada waktu itu disebut dunia bebas [free world]... rezim-rezim komunis didirikan di Laos, Kamboja, dan Vietnam pada Maret dan April 1975, pemberontakan aktif komunis masih mewabah di Thailand dan Malaysia, dan konsep adanya ancaman komunis besar-besaran terhadap Asia Tenggara dan teori domino masih tetap diyakini. Pada waktu yang bersamaan, terjadi kesepakatan yang kuat di Washington bahwa Indonesia sebagai pengimbang antikomunis sangat penting untuk melawan ekspansi komunis di Asia, baik di kawasan tersebut maupun di dalam Indonesia sendiri.¹⁴²

250. Hubungan saling menguntungkan bagi kepentingan setiap negara ini sudah terjalin baik sejak awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan ditekankan di tingkat kepemimpinan tertinggi. Hal ini mencakup dukungan Amerika Serikat untuk pengambilalihan Irian Barat oleh Indonesia dan Penentuan Pendapat Rakyat di sana pada 1969.* Dalam memo kepada Presiden Gerald Ford pada September 1974, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger,

* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menyatakan pada Juli 1969: "Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat terjadi seperti sebuah cerita tragedi Yunani, akhirnya sudah diperkirakan. Tokoh jahat yang utama, Pemerintah Indonesia, tidak dan tidak akan pernah mengizinkan penyelesaian lain selain memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Kegiatan penentangan mungkin meningkat, tapi Angkatan Bersenjata Indonesia akan mampu membendung, dan jika perlu, memberantasnya." Presiden Nixon berkunjung ke Indonesia pada waktu Penentuan Pendapat Rakyat baru saja selesai. Penasihat Keamanan Nasionalnya, Henry Kissinger, mengatakan kepadanya: "Anda harus memberitahu (Soeharto) bahwa kita memahami masalah yang mereka hadapi di Irian Barat". Brad Simpson (ed.), *Indonesia's 1969 Takeover of West Papua Not by "Free Choice"*, dikirim 9 Juli 2004, <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB128/index.htm>, pada Juli 2005. Kissinger menjadi direktur dan pemegang saham di perusahaan tambang emas dan tembaga AS Freeport McMoran setelah perusahaan itu memenangi konsesi di Irian Barat pada 1967.

merekomendasikan agar Ford bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik “untuk meyakinkan Pemerintah Soeharto bahwa Anda menganggap Indonesia sangat penting sebagai kekuatan besar di kawasan Asia Timur, dan bahwa Anda berniat terus memberikan bantuan ekonomi dan militer Amerika Serikat untuk Indonesia”,¹⁴³ Pengarahan tersebut selanjutnya menggariskan “pentingnya Indonesia secara strategis bagi kita” dalam arti geografis, jumlah penduduk, sumberdaya alam, dan peran konstruktif di kawasan, baik di Vietnam maupun di ASEAN sebagai penyeimbang tekanan-tekanan dari Uni Soviet dan Cina. Sementara itu, Presiden Soeharto menginginkan menteri luar negerinya untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat yang baru, agar menyampaikan kepadanya harapan Presiden Soeharto untuk membangun hubungan personal yang akrab, mengundangnya untuk mengunjungi Indonesia dan memberikan bantuan militer dan ekonomi. Kedua presiden tersebut bertemu dua kali pada 1975: pada Juli ketika Presiden Soeharto mengunjungi Amerika Serikat, dan pada Desember ketika Presiden Ford mengunjungi Indonesia.*

251. Pemerintah Amerika Serikat mengetahui rencana-rencana Indonesia untuk memasukkan Timor-Leste ke dalam wilayahnya. Setidaknya sejak Februari 1975, Pemerintah Amerika Serikat juga mengetahui bahwa ada kemungkinan digunakannya kekuatan, dan hal ini berarti akan melibatkan penggunaan perlengkapan militer yang dipasok oleh Amerika Serikat. Sebagai contoh, para pejabat Amerika Serikat sepakat bahwa latihan militer gabungan Indonesia yang dilaksanakan di Lampung, Sumatra Selatan, pada 11 Februari 1975, hampir pasti merupakan bagian dari persiapan untuk menguasai Timor. Mengomentari latihan tersebut, Konsulat Amerika Serikat di Surabaya menulis:

Saya dan atase politik Zingsheim terkesima dengan kesamaan kondisi lapangan dan gaya latihan ini, dengan yang akan dilibatkan dalam operasi Indonesia untuk menguasai Dili. Latihan itu meliputi pengoperan vertikal landasan pacu Branti, serangan amfibi terhadap daerah pantai terdekat, dan gempuran dari laut dan udara... dan pengerahan pasukan penerjun payung di wilayah musuh.†

* Diklaim bahwa faktor penting dalam keputusan Amerika Serikat untuk mendukung pengambilalihan Timor oleh Indonesia adalah jaminan bahwa selat laut dalam antara Timor dan Wetar tetap berada di tangan negara sahabat, karena selat tersebut dapat digunakan untuk jalur lintas tanpa hambatan antara Samudera Pasifik dan Hindia bagi kapal-kapal selam nuklir Amerika Serikat. Lihat Michael McGuire *The Geopolitical Importance of Strategic Waterways in the Asian-Pacific Region*, Orbis, Vol.19, No.3, Edisi Musim Gugur 1975, hal. 1058-76 dan Michael Richardson, “Jakarta rules the way: why Indonesian goodwill is vital to America’s Indian Ocean submarine force”, *The Age*, 4 Agustus 1976. CAVR belum bisa memperoleh kepastian mengenai klaim ini. Namun, jelas bahwa Amerika Serikat khawatir dukungan Pemerintah Soeharto untuk “prinsip kepulauan” dalam berbagai negosiasi mengenai hukum laut akan membatasi transit Amerika Serikat melalui kepulauan tersebut. Lihat memo Menteri Luar Negeri Henry Kissinger untuk Presiden Ford, 21 November 1975. Dokumen 124 Dokumen Terdeklasifikasi National Security Archives.(NSA)

† Konsulat Amerika Serikat Surabaya, 20 Februari 1975. Dokumen 23 NSA. Kapal-kapal yang digunakan dalam latihan dilabuhkan di Surabaya dan pasukan tentara berasal dari Malang di Jawa Timur

252. Indonesia pada waktu itu menyangkal bahwa latihan itu ada hubungannya dengan Timor, tapi invasi ke Dili sepuluh bulan kemudian mengikuti pola yang dipaparkan di atas. Dalam dua kesempatan tersebut, gempuran terhadap garis pantai dilakukan dengan menggunakan kapal perang yang dipasok Amerika Serikat, KRI Martadinata. Hubungan kawat antara para pejabat Australia dan Amerika Serikat pada waktu itu mengungkapkan kekhawatiran bahwa perebutan Timor-Leste dengan kekuatan yang menggunakan peralatan Amerika Serikat dan Australia akan merusak hubungan dengan Indonesia.¹⁴⁴

253. Pada masa itu juga, pemimpin oposisi Selandia Baru, Robert Muldoon, berkunjung ke Jakarta, dan diberi penjelasan mengenai Timor oleh para pemimpin Indonesia. Kedutaan Amerika Serikat melaporkan ke Washington:

Sikap yang diambil oleh Suharto dan [Adam] Malik dengan Muldoon memperkuat dugaan bahwa Pemerintah Indonesia telah memutuskan memasukkan Timor-Leste ke dalam wilayahnya, meletakkan dasar politik untuk suatu pengambilalihan, dan mengharapkan bahwa negara-negara sahabat akan menemukan cara untuk tidak menentang tindakan ini.*

254. Menanggapi penyelidikan Dewan Keamanan Nasional AS pada Maret 1975 mengenai kebijakan yang akan diambil jika Indonesia menggunakan kekuatan di Timor-Leste, Menteri Luar Negeri Kissinger menyetujui kebijakan non-aksi. Penyelidikan tersebut juga mencakup rekomendasi dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, David Newsom, yang mendukung non-aksi:

Duta Besar Newsom telah merekomendasikan kebijakan umum untuk tidak bertindak. Ia memberi alasan bahwa kita memiliki kepentingan yang besar di Indonesia dan tidak memiliki kepentingan di Timor-Leste. Jika kita mencoba membujuk Indonesia untuk tidak melakukan apa yang Suharto [sic] anggap sebagai penggunaan kekuatan yang perlu, hal ini bisa menimbulkan kesulitan besar dalam hubungan kita.¹⁴⁵

255. Kebijakan ini diterapkan dalam pertemuan tingkat tinggi Ford – Soeharto di Camp David pada 5 Juli 1975. Menteri Luar Negeri Kissinger tidak menyinggung Timor Portugis dalam arahan yang diberikannya untuk Presiden Ford sebelum pertemuan tersebut, dan selama pertemuan itu Amerika Serikat tidak mengemukakan

* Kedutaan AS di Jakarta, 25 Februari 1975. Dokumen 28 NSA. Berdasarkan komunikasi AS: "Adam Malik mengatakan kepada Muldoon bahwa pemerintahan Timor Portugis dipengaruhi komunis dan bahwa orang-orang Timor prokemerdakaan telah menawarkan pangkalan-pangkalan kepada Uni Soviet dan RRC sebagai balasan atas dukungan untuk gerakan kemerdekaan. Malik mengatakan bahwa para pengungsi melintasi perbatasan ke wilayah Indonesia untuk menghindari teror oleh kaum kiri di Timor Portugis... Soeharto mengatakan bahwa, karena situasi serius di Timor, Pemerintah Indonesia berharap negara-negara sahabat seperti Australia dan Selandia Baru 'akan memahami' posisi Indonesia, yang diartikan oleh Pemerintah Selandia Baru sebagai permintaan agar Selandia Baru 'memahami' kemungkinan pengambilalihan Timor Portugis oleh Indonesia."

isu tersebut atau memperingatkan Indonesia tentang penggunaan kekuatan atau peralatan Amerika, meski Presiden Soeharto memberikan kesempatan ketika ia dengan sukarela mengatakan bahwa Indonesia tidak akan menggunakan kekuatan. Sebagai tanggapan atas penjelasan Presiden Soeharto mengenai isu tersebut, Presiden Amerika Serikat membatasi diri untuk bertanya apakah Portugal telah menentukan tanggal bagi rakyat Timor Timur untuk memilih. Sebelumnya, dalam pertemuan itu, Presiden Amerika mengumumkan paket bantuan militer untuk Indonesia.

256. Melalui jalur-jalur diplomatik, para pejabat Amerika Serikat menyampaikan kepada Indonesia bahwa AS memilih integrasi secara damai melalui penentuan nasib sendiri dan mengemukakan kekhawatirannya bahwa penggunaan kekuatan dan peralatan militer AS akan menimbulkan reaksi menentang di Kongres dan merugikan hubungan kedua negara.¹⁴⁶ Namun, kebijakan resmi adalah untuk tetap tampak tidak terlibat dan tidak terlalu peduli. Ketika diberitahu pada 8 Oktober 1975 bahwa Indonesia telah memulai operasi militer di Timor, Menteri Luar Negeri Kissinger menanggapi:

*Saya berasumsi Anda akan tetap menutup mulut mengenai hal ini... mengenai Indonesia. Juga di PBB... pastikan bahwa utusan AS tidak akan membuat pernyataan apapun.*¹⁴⁶

257. Pada 5 Desember 1975, menanggapi berbagai serangan yang dilakukan oleh Indonesia pra-invasi, Presiden Fretilin dan Republik Demokratik Timor-Leste yang baru diproklamasikan, Xavier do Amaral, mengirim telegram kilat kepada Presiden Amerika Serikat meminta AS untuk campurtangan:

Pemerintah saya percaya suara AS dapat mencegah perang yang akan menjadi perang yang panjang, berdarah, dan menghancurkan... Demi perdamaian, kami sangat memohon Anda untuk campur tangan.

258. Pemerintah AS tidak menghiraukan permohonan tersebut. Catatan Dewan Keamanan Nasional mengenai korespondensi tersebut menunjukkan bahwa pada 15 Desember surat tersebut dimasukkan ke dalam berkas dengan sebuah catatan:

Tidak perlu ada tindakan. Tidak perlu dibalas—ini masalah sensitif.¹⁴⁷

259. Presiden Ford dan Soeharto kembali bertemu di Jakarta pada 6 Desember 1975, sehari sebelum invasi besar-besaran Indonesia ke Timor-Leste. Menurut catatan

.....
* Pada 20 Agustus 1975, Duta Besar Newsom mengatakan kepada Kepala Bakin (Badan Koordinasi Intelijen), Letnan Jenderal Yoga Sugama: "Pemerintahan Indonesia harus waspada jika peralatan AS digunakan dalam pendudukan paksa Timor Portugis, hal ini dapat mengakibatkan diberlakukannya pasal-pasal dari Undang-Undang Bantuan Luar Negeri yang dapat membahayakan kelangsungan program bantuan militer. Karena itu, jalan keluar terbaik adalah memasukkan Timor Portugis ke dalam wilayah Indonesia secara damai." Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, 21 Agustus 1975. Dokumen 73 NSA. Pada Oktober, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Ford, Letnan Jenderal Brent Scowcroft, disarankan oleh stafnya untuk memperingatkan Ali Moertopo mengenai komplikasi politik yang akan terjadi jika peralatan AS digunakan. Dokumen 104 NSA.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pertemuan tersebut terjadi pada pukul 8 pagi, dan delegasi Amerika berangkat menuju pelabuhan udara pada pukul 10.30. Juga hadir pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Kissinger, Menteri Luar Negeri Adam Malik, Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, Duta Besar Newsom, dan seorang jurubahasa. Sepanjang pertemuan mereka, yang terutama berpusat pada pembahasan mengenai Indocina dan membendung komunisme, Presiden Soeharto mengemukakan situasi di Timor-Leste, yang ia katakan sebagai ancaman bagi keamanan Indonesia dan kawasan setelah deklarasi kemerdekaan oleh Fretilin.

260. Mengenai perbincangan tersebut, Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa Presiden Indonesia mengatakan kepada delegasi Amerika:

Kami meminta pengertian Anda jika kami menganggap perlu mengambil tindakan cepat atau drastis.

261. Presiden Ford menjawab:

Kami akan mengerti dan tidak akan menekan Anda dalam hal ini. Kami mengerti masalah yang Anda hadapi dan niat yang Anda miliki.

262. Delegasi Amerika mengatakan bahwa penggunaan persenjataan buatan Amerika Serikat dapat menimbulkan masalah, dan Menteri Luar Negeri Kissinger menambahkan:

Bergantung pada bagaimana kita memahaminya: apakah ini untuk membela diri atau operasi asing. Penting bahwa apapun yang Anda akan lakukan dapat cepat selesai. Kami dapat memengaruhi reaksi di Amerika jika, apapun yang akan terjadi, terjadi setelah kami kembali. Dengan demikian, akan lebih sedikit kesempatan bagi orang-orang berbicara secara tidak resmi. Presiden akan kembali pada Senin pukul 14.00 waktu Jakarta. Kami memahami masalah Anda, dan pentingnya untuk bergerak cepat. Tetapi saya hanya mengatakan bahwa akan lebih baik jika hal itu dilakukan setelah kami kembali.

263. Menteri Luar Negeri Kissinger menyampaikan pertanyaan terakhir:

Apakah Anda mengantisipasi perang gerilya yang lama di sana?

264. Presiden Soeharto menjawab:

*Kemungkinan akan ada perang gerilya kecil.**

.....
* Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, 6 Desember 1975. Dokumen 148 NSA. Pada 1977, Pemerintahan Carter disarankan untuk menolak permintaan dari Anggota Kongres Donald Fraser untuk salinan laporan tersebut dengan alasan bahwa ini adalah hak istimewa dan akan merugikan hubungan luar negeri Amerika Serikat jika dipublikasikan. Dokumen 405 NSA.

265. Kedua pihak menghindari membuat pernyataan eksplisit mengenai intervensi militer, tetapi jelas dari pertemuan tersebut dan dari berbagai pernyataan mengenai penggunaan persenjataan Amerika Serikat dan perang gerilya, hal ini diketahui dan disetujui oleh Presiden Amerika Serikat. Dalam memberikan restunya, ia tidak menyebutkan apapun mengenai hak penentuan nasib sendiri atau dampak kemanusiaan dari perang. Setuju dengan penggunaan kekuatan juga berarti tidak menghiraukan nasihat dari para pejabat mengenai ketidaksahan penggunaan persenjataan AS, karena sebagian besar peralatan angkatan bersenjata Indonesia adalah buatan Amerika.^{*} Indonesia tidak menghiraukan permintaan untuk menunggu: invasi mulai dilancarkan dini hari pada Minggu, 7 Desember, lebih daripada 24 jam sebelum jadwal waktu kedatangan Presiden Ford di Amerika Serikat.

266. Dalam ulasan Gedung Putih mengenai kunjungan pada 10 Desember 1975, Presiden Ford dan Menlu Kissinger tidak membuat pernyataan apapun mengenai Timor. Presiden Ford mengatakan:

*Penting untuk pergi ke sana [Indonesia] setelah kejadian di Vietnam, untuk menunjukkan bahwa kita masih menjadi sebuah kekuatan Asia. Saya terkesan dengan Suharto [sic], yang mencoba untuk mempersatukan negaranya dan menjalankan pemerintahan yang layak, serta memperjuangkan antikomunisme di sana.*¹⁴⁸

267. Pada 13 Desember, ia mengirim cenderamata pribadi berupa bola-bola golf kepada Presiden Indonesia.[†]

268. Amerika Serikat memberi suara yang mendukung Resolusi 384 Dewan Keamanan PBB yang disepakati secara bulat pada 22 Desember 1975, yang menegaskan hak penentuan nasib sendiri dan menyerukan kepada Indonesia untuk menarik mundur pasukannya. AS tetap bersikap hati-hati selama sesi tersebut, tetapi mencoba membantu Indonesia di belakang layar tanpa terlalu menyinggung sekutunya di NATO, Portugal, yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat untuk mempertahankan pangkalan militer AS di Azores, dan dukungan untuk berbagai isu lain di PBB. Sementara turut mendorong “sebuah penerimaan di PBB agar Jakarta dapat menyelamatkan muka”, AS juga menawarkan untuk membantu Portugal

* Memorandum dari Menteri Luar Negeri Kissinger untuk Presiden Ford pada 21 November 1975 menyatakan: “Penggunaan persenjataan yang dipasok AS oleh Indonesia dalam sebuah pendudukan terbuka terhadap wilayah ini, akan bertentangan dengan undang-undang AS.” Dokumen 124 NSA.

† Dewan Keamanan Nasional, 13 Desember 1975. Dokumen 168 NSA. Kissinger selanjutnya membela kebijakan Pemerintahan Ford mengenai Timor-Leste. Dalam sebuah forum publik pada 2001, ia mengatakan kepada aktivis Timor-Leste, Constancio Pinto: “Timor tidak pernah dibahas dengan kami ketika kami di Indonesia. Di pelabuhan udara ketika kami berangkat, pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa mereka akan menduduki koloni Portugis di Timor. Bagi kami hal itu tidak tampak sebagai peristiwa yang sangat penting karena India menguasai koloni Portugis yaitu Goa sepuluh tahun sebelumnya, dan bagi kami hal itu tampak sebagai proses lain dari dekolonisasi. Tidak seorang pun tahu bahkan secara samar-samar apa yang akan terjadi selanjutnya, dan tidak seorang pun meminta pendapat kami, dan terus terang saya tidak tahu apa yang harus kami katakan jika ada yang menanyakan pendapat kami. Ini benar-benar disampaikan kepada kami ketika kami tengah beranjak pergi.” *Slate, Whopper of the Week: Henry Kissinger*, 7 Desember 2001.

mengamankan pembebasan 23 tentara yang ditawan di Timor Indonesia.* Amerika Serikat abstain dalam Resolusi 389 Dewan Keamanan (1976) yang disahkan pada 22 April 1976 karena, menurut wakil AS, resolusi tersebut gagal mengakui “pernyataan penting yang disampaikan oleh perwakilan Indonesia bahwa sejumlah kekuatan telah ditarik mundur, dan penarikan mundur tersebut terus berlangsung”. Ia mengatakan abstainnya Amerika Serikat jangan ditafsirkan bahwa Amerika “tidak memberi dukungan terhadap hak rakyat Timor-Leste atau rakyat di manapun di dunia atas hak-hak kesetaraan dan penentuan nasib sendiri”.¹⁴⁹ Amerika Serikat juga abstain dalam pemungutan suara di Sidang Umum mengenai isu tersebut, yang dilakukan pada 12 Desember 1975, kemudian memberi suara menentang semua resolusi Sidang Umum berikutnya sampai 1999.

269. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat mengetahui bahwa persenjataan AS digunakan dalam invasi terhadap Timor-Leste. Anggota Kongres Helen Meyner menyampaikan kepada sebuah penyelidikan Kongres pada 1977 bahwa Jenderal Moerdani membenarkan penggunaan peralatan Amerika Serikat:

*Ketika kami bertemu di Djakarta dengan beberapa perwira tinggi Indonesia...John Salzberg menanyakan kepada Jenderal Moerdani, apakah persenjataan AS telah digunakan pada 1975. Ia mengatakan, “Tentu saja, ini satu-satunya persenjataan yang kami punya. Tentu saja persenjataan AS digunakan”.*¹⁵⁰

270. Dewan Keamanan Nasional (NSC) AS diberitahu pada 12 Desember 1975 bahwa peralatan AS digunakan dalam invasi tersebut.¹⁵¹ Laporan kepada NSC menyatakan bahwa peralatan yang dipasok AS meliputi berikut ini:

- Setidaknya sembilan kapal bekas angkatan laut AS, yang salah satunya, *KRI Martadinata*, terlibat dalam penggempuran pesisir sejak 22 November, dan ikut serta dalam gempuran laut selama satu jam yang mengawali serangan di Dili pada 7 Desember
- 13 pesawat yang digunakan dalam serangan di Dili dan Baucau
- Perlengkapan yang digunakan oleh Brigade Lintas Udara ke-18, yang menerjunkan pasukan di atas Dili pada 7 Desember dan Brigade Lintas Udara ke-17, yang terlibat dalam penerjunan pasukan di Baucau pada 9 Desember; perlengkapan yang digunakan terdiri atas senapan, senapan mesin, peluncur granat, mortir, peluncur roket, parasut dan radio; para penerjun payung utama mereka adalah didikan AS
- Sejumlah perlengkapan radio AS digunakan oleh pusat komunikasi di Atambua, Timor Indonesia, yang mengendalikan operasi Timor

* Dewan Keamanan Nasional, 19 Desember 1975. Dokumen 178 NSA. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB pada waktu itu, Daniel Patrick Moynihan, menulis: “Amerika berharap semuanya akan terjadi seperti yang terjadi, dan berusaha untuk mewujudkannya. Departemen Luar Negeri ingin agar Persekitaran Bangsa-Bangsa benar-benar terbukti tidak efektif dalam langkah apapun yang diambilnya. Tugas ini diberikan kepada saya, dan saya melakukannya lumayan sukses.” *A Dangerous Place*, Little Brown, 1980, hal. 247.

271. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi bahwa menurut pendapatnya, Amerika Serikat adalah pihak yang paling tanggung jawab. “Amerika Serikat ialah yang paling buruk. Paling buruk, karena ia satu-satunya kekuatan yang mampu mengatakan kepada Indonesia, setelah invasi, bukan hanya sebelum, tetapi juga sesudahnya: ‘Jangan nakal, hentikan pembunuhan ini,’ tapi mereka tidak melakukan itu...dan mereka sebenarnya tahu mana yang benar.”¹⁵²

272. Kelompok-kelompok dalam Kongres AS secara aktif terus mengemukakan isu penggunaan peralatan militer pasokan Amerika Serikat oleh Indonesia. Menindaklanjuti penyelidikan yang dilakukan oleh Senator Gary Hart pada Desember 1975, Senator Hubert Humphrey dan Clifford Case membawa isu tersebut; dan serangkaian audiensi Kongres dilangsungkan pada 1977 setelah Jimmy Carter mulai menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari.

273. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada penyelidikan Kongres pada Maret 1977 bahwa persenjataan AS digunakan selama invasi itu. Mereka juga bersaksi bahwa, sebagai tanggapan, Pemerintah “menanggihkan secara administratif” pemberian bantuan tambahan antara Januari dan Juni 1976 “untuk memastikan bahwa kita mematuhi statuta yang berlaku”, tapi hanya beberapa anggota Kongres saja yang diberitahu secara pribadi mengenai penanggihan tersebut, dan keputusan itu tidak diumumkan secara terbuka.¹⁵³

274. Tindakan ini, yang diambil atas arahan Menteri Luar Negeri Kissinger, terutama dirancang untuk memastikan kelanjutan dukungan militer Amerika Serikat pada Indonesia, ketimbang untuk menaati hukum. Hal ini bukan dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia di Timor-Leste, dan pada praktiknya tidak mengubah kenyataan tentang dukungan militer AS untuk agresi Indonesia.* Penyelidik diberitahu bahwa peralatan militer yang telah disepakati terus dikirimkan; bahwa bantuan militer kembali diberikan pada akhir Juni 1976, karena terdapat “penurunan tingkat kekerasan yang signifikan di Timor”; dan bahwa Kongres tetap mengizinkan bantuan militer untuk Indonesia, setelah gagal usul amandemen yang mendesak penghentian bantuan. Hubungan dengan Indonesia tidak terpengaruh, karena para pejabat di Jakarta tidak mengetahui tentang penanggihan, atau yakin bahwa penanggihan tersebut hanya disebabkan alasan “administratif”. Brent Scowcroft diberi pengarahannya sebelum bertemu dengan Adam Malik pada Juni 1976:

*Delegasi Indonesia belum mengemukakan tentang penanggihan kita terhadap pengiriman peralatan militer kepada mereka... Jika mereka menyinggung tentang hal itu, Anda dapat mengatakan bahwa penanganan kami yang hati-hati mengenai masalah ini telah berhasil melumpuhkan para pengkritik di Kongres seperti Senator Humphrey, dan pada saat yang sama memungkinkan kami kembali melanjutkan pengiriman bantuan militer ke Jakarta.*¹⁵⁴

* Dokumen 296 NSA. Bahkan apabila Kongres menghentikan bantuan militer, Pemerintah AS telah berkomitmen untuk menemukan cara mengkalinya dan mulai membuat rencana-rencana cadangan pada awal 1976 untuk melanjutkan bantuan. Dokumen 235 NSA.

275. Pada Oktober 1976 Pemerintah AS membenarkan berlanjutnya penggunaan persenjataan AS di Timor-Leste:

Kami paham bahwa Pemerintah Indonesia dalam beberapa bulan ini telah berusaha menggunakan peralatan non-AS dalam operasi Timor. Sejumlah unit perlengkapan AS tidak lagi digunakan. Namun, bukti menunjukkan bahwa peralatan yang dipasok Amerika Serikat—terutama peralatan transportasi dan komunikasi—masih digunakan. Pemerintah Indonesia telah diperingatkan mengenai kekhawatiran kita akan hal tersebut.¹⁵⁵

276. Kerjasama militer terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dukungan AS untuk Indonesia selama dua dekade berikutnya.*

277. Pemerintah AS berikutnya melanjutkan kebijakan dasar mengenai Timor yang dibangun oleh Pemerintahan Ford-Kissinger. Hal ini dijelaskan kepada Audiensi Senat AS pada 1992 dalam pernyataan berikut:

Pada 1976, para pembuat kebijakan Amerika Serikat memutuskan untuk menerima penggabungan Timor-Leste ke dalam wilayah Indonesia sebagai fakta yang telah terjadi. Mereka memutuskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat dilakukan oleh Amerika Serikat atau dunia, yang dapat mengubah kenyataan itu. Karena itu, menentang penggabungan Timor-Leste oleh Indonesia hanya akan memberi sedikit pengaruh pada situasi tersebut. Dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut, pemerintahan-pemerintahan sebelumnya membuat kebijakan yang dilanjutkan secara konsisten dan bipartisan: Kami menerima pengambilalihan Timor-Leste oleh Indonesia tanpa mendesak dilakukannya suatu penentuan nasib sendiri secara sah. Jelas, sebuah proses demokratis dalam penentuan nasib sendiri akan lebih konsisten dengan nilai-nilai yang kita anut; tapi kenyataan yang ada pada 1975 tidak memungkinkan alternatif tersebut. Menerima dimasukkannya Timor-Leste ke dalam wilayah Indonesia merupakan satu-satunya pilihan yang realistis.¹⁵⁶

278. Pemerintahan Carter (1977-1981) terus mengutamakan pentingnya Indonesia. Zbigniew Brzezinski, penasihat keamanan nasional Presiden Carter yang agresif, mendukung pereratan hubungan kedua negara.¹⁵⁷ Kunjungan Wakil Presiden Walter Mondale kepada Presiden Soeharto di Jakarta pada Mei 1978, dan kunjungan berkala Jenderal Moerdani ke Amerika Serikat yang terus berlanjut, menghasilkan peningkatan kerjasama militer AS dengan Indonesia. Dalam audiensi Kongres pada 1981, Wakil Menteri Luar Negeri Holbrooke merangkum mengapa AS begitu positif mengenai Indonesia:

* Program Bantuan Militer (Military Assistance Programme, MAP) Amerika Serikat untuk Indonesia berakhir pada 1978, tapi dilanjutkan dengan program penjualan kredit militer luar negeri (Foreign Military Sales, FMS).

*Situasi yang terjadi di Timor-Leste adalah satu dari sejumlah kekhawatiran Amerika Serikat yang sangat penting di Indonesia. Indonesia, dengan jumlah penduduk 150 juta jiwa, merupakan negara terbesar kelima di dunia, anggota Gerakan Non-Blok yang moderat, negara penghasil minyak yang penting—yang memainkan peran moderat dalam OPEC—serta memiliki posisi strategis, dengan laut yang digunakan untuk jalur lintas perdagangan yang luas, antara Samudera Pasifik dan Hindia. Presiden Suharto [sic] dan para pemimpin terkemuka Indonesia lainnya telah secara terbuka menyerukan dibebaskannya para tahanan kita di Iran. Kedudukan Indonesia dalam Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara—ASEAN—juga penting, dan telah memainkan peran sentral dalam mendukung Thailand dan mempertahankan keamanan Thailand ketika terjadi aksi-aksi yang mengganggu keamanan oleh Vietnam di Indocina. Akhir kata, Indonesia telah memberikan perlakuan yang manusiawi bagi lebih daripada 50.000 pengungsi Indocina dan mengambil inisiatif untuk menyediakan salah satu pulauanya sebagai pusat pemrosesan pengungsi ASEAN. Indonesia, tentunya, penting bagi para sekutu utama AS di kawasan tersebut, terutama bagi Jepang dan Australia. Kami sangat menghargai hubungan kerjasama kami dengan Indonesia.*¹⁵⁸

279. Pemerintahan Carter menambahkan penekanan yang lebih kuat pada hak-hak asasi dan kebutuhan kemanusiaan dalam kebijakan tentang Timor yang dirangkum di atas, dan hal ini dijalankan oleh pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Selama masa jabatannya, lembaga-lembaga internasional diizinkan beroperasi di Timor-Leste, para pejabat AS diizinkan bertemu dengan José Ramos-Horta, dan Laporan Tahunan Departemen Luar Negeri tentang Praktik Hak-hak Asasi Manusia, yang dimulai pada 1977, sering menyebut tentang pelanggaran di Timor-Leste.

280. Namun, pada saat yang sama, sebagian besar kematian yang terjadi di Timor-Leste terjadi pada periode ini, jumlah tentara Indonesia meningkat pesat, dan Resistansi Timor-Leste hampir tertumpas seluruhnya.’ Arnold Kohen memberi kesaksian kepada Komisi:

Adalah salah kalau kita percaya bahwa tragedi di Timor-Leste merupakan tanggungjawab eksklusif dari Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Kissinger. Pernah ada kesempatan untuk mengubah

* Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Laksamana Sudomo, mengatakan kepada Duta Besar Masters pada Juli 1978 bahwa Indonesia sudah menempatkan 29.000 personel militernya di Timor-Leste. Dokumen 602 NSA. Jenderal Moerdani menyangkal pernyataan bahwa bom napalm dan herbisida digunakan di Timor selama periode ini. Laporan Kedutaan AS, 3 Januari 1978. Dokumen 502 NSA. Demikian pula para pejabat AS menyangkal pernyataan Fretilin bahwa personel AS turut berpartisipasi dalam pertikaian militer di Timor selama periode ini. Menteri Luar Negeri Cyrus Vance, 7 Juli 1978. Dokumen 599 NSA. Detail yang berhubungan dengan klaim Fretilin ditemukan dalam Dokumen 578 dan 614 NSA.

kebijakan Amerika terhadap pendudukan Indonesia atas Timor-Leste pada awal 1977, ketika Presiden Jimmy Carter mengambilalih jabatan...dan menyerukan perhatian yang lebih besar pada hak-hak asasi manusia dalam membuat berbagai kebijakan luar negeri AS... Harapan-harapan semacam ini dihancurkan.¹⁵⁹

281. Pemerintahan Carter juga gagal membahas isu mendasar tentang penentuan nasib sendiri. Pemerintahannya mengakui kedaulatan Indonesia, tidak menyinggung tentang penentuan nasib sendiri dalam laporan hak-hak asasi manusia tahunannya, dan tidak mendukung berbagai resolusi PBB mengenai Timor.¹⁵⁹

282. Setelah berakhirnya Perang Dingin dan peristiwa pembantaian Santa Cruz pada 1991, meningkatlah berbagai tekanan kepada AS untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam usaha mencari pemecahan. Sejumlah pertemuan dengan Portugal terjadi. Pada Januari 1992, sekelompok tokoh politik dan akademik Portugis yang terkenal, dipimpin oleh Presiden Ramalho Eanes, menyampaikan surat terbuka, yang menggunakan kata-kata pedas, kepada Presiden George Bush, mendakwa AS tanggung jawab, dengan berdiam diri, atas berbagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di Timor-Leste.¹⁶⁰ Meski Amerika Serikat telah menolak resolusi Sidang Umum pada 1982 yang meminta Sekretaris Jenderal membuka konsultasi dengan semua pihak yang terkait langsung, Amerika Serikat sekarang menyatakan dukungannya terhadap dorongan Sekretaris Jenderal untuk memulai pembahasan antara Portugal dan Indonesia mengenai isu tersebut, dan pada 1992 serta 1993, mendukung berbagai inisiatif yang disampaikan Portugal di Komisi Hak Asasi Manusia.¹⁶¹

283. Duta Besar Barry, wakil pemerintahan baru Clinton di Indonesia, mengunjungi Timor-Leste pada 21-23 Februari 1993 untuk “mendapatkan gambaran mutakhir”. Ia melaporkan, bahwa:

kehadiran militer yang represif dan meluas merupakan kendala utama pencapaian integrasi oleh pemerintah... Rakyat Timor tidak menyukai paternalisme, korupsi, dan dominasi militer terhadap ekonomi setempat, dan juga kekejaman mereka...Penggambaran yang paling baik mengenai aspirasi rakyat Timor berasal dari seorang pastor Salesian yang sangat memahami situasi di sana: “Mereka tidak ingin diganggu”.

284. Duta Besar tersebut menutup dengan perkataan “integrasi tidak akan pernah bisa diterima, selama diminta dengan todongan senjata...” tapi tidak menganggap sebagai solusi apa yang belakangan diajukan oleh Indonesia sendiri beberapa tahun kemudian:

.....
* Setelah setiap pemungutan suara di PBB, Duta Besar Indonesia untuk PBB menulis kepada Pemerintah Carter untuk mengemukakan “terimakasih yang tulus dan penghargaan untuk dukungan yang diberikan kepada posisi Indonesia”. Lihat sebagai contoh, Dokumen 491 dan 713 NSA.

Bahkan jika orang-orang Indonesia telah siap untuk memberi pilihan penentuan nasib sendiri (dan mereka tidak siap), Timor-Leste tidak dapat bertahan sebagai suatu entitas terpisah. Otonomi terdengar bagus, tetapi sulit untuk mewujudkannya dalam negara yang sangat sentralistik ini.¹⁶²

285. Pemerintah Clinton secara aktif mendukung proses pada 1999, termasuk melalui Dewan Keamanan. Amerika Serikat merupakan salah satu negara penyumbang terbesar terbentuknya UNAMET, dan Presiden Clinton, Menteri Luar Negeri Madeleine Albright, yang telah bertemu sebelumnya dengan Xanana Gusmão di Jakarta, serta Menteri Pertahanan William Cohen, masing-masing menekan rekan-rekan Indonesianya untuk membendung kekerasan yang mengancam jajak pendapat.¹⁶³ Menyambut hasil jajak pendapat pada 4 September 1999, Menteri Luar Negeri Albright mengatakan bahwa AS akan terus menjadi pendukung kuat proses yang dibantu oleh PBB, untuk mengubah Timor-Leste menjadi sebuah negara merdeka.¹⁶³ Setelah kekerasan pecah, Presiden Clinton mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras pada 9 dan 10 September 1999, dengan menekankan perlunya kehadiran pasukan keamanan internasional di Timor-Leste dan dukungan AS untuk pasukan semacam itu, jika Indonesia tidak dapat memulihkan ketertiban. Amerika Serikat menempatkan 1.000 personel angkatan lautnya di perairan Timor, tapi membatasi keterlibatan langsung dalam Interfet dengan membantu secara logistik, termasuk pengangkutan untuk pengerahan pasukan-pasukan lain yang berpartisipasi.

Jepang

286. Jepang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1956. Jepang bukan anggota tetap Dewan Keamanan, tetapi merupakan satu-satunya anggota non-permanen Asia Timur ketika Dewan Keamanan memperdebatkan masalah Timor-Leste pada 1975 dan 1976.

287. Pada 1960, Jepang mendukung diterimanya Deklarasi PBB tentang Pemberian Kemerdekaan untuk Negara dan Bangsa Jajahan dan prinsip-prinsip terkait tentang pelaporan atas koloni.¹⁶⁴ Meskipun demikian, Jepang bersikap abstain terhadap Resolusi 1542 (XV) Sidang Umum yang mencantumkan Timor Portugis sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri.

288. Menyusul invasi Indonesia, Jepang mendukung Resolusi Dewan Keamanan 384 (1975), yang disetujui dengan suara bulat pada 22 Desember 1975. Resolusi itu menguatkan hak rakyat Timor Leste yang tidak dapat dicabut, yaitu hak atas penentuan nasib sendiri, menyesali campurtangan angkatan bersenjata Indonesia, dan menuntut Indonesia segera mundur.

.....
* Kepala UNAMET, Ian Martin, menulis bahwa AS tidak menekan Jakarta untuk menerima penjaga perdamaian sebelum jajak pendapat karena kuatir hal ini akan membahayakan proses tersebut dan ragu bahwa pengamanan dapat lebih diperkuat lagi. (Ian Martin, *Self-Determination in East Timor, The United Nations, the Ballot, and International Intervention*, Lynne Rienner Publishers, London, hal. 33.)

289. Meskipun demikian, Jepang berusaha memengaruhi dan melemahkan resolusi ini. Duta Besar Jepang untuk PBB pada saat itu, Shizuo Saito, pernah menulis:

Jepang selalu mengambil inisiatif aktif dan terdepan... (dan) terutama memberi masukan agar maksud Indonesia untuk menarik pasukannya akan dihormati, dan agar kecaman tidak akan terlalu menyakitkan bagi Indonesia. Pemerintah lainnya berpihak pada posisi Jepang.¹⁶⁵

290. Peran Jepang dalam Dewan Keamanan menyangkut isu itu ditegaskan oleh José Ramos-Horta, yang mewakili Fretilin dalam pertemuan:

Selama semua debat Dewan Keamanan mengenai Timor Timur pada 1975 dan 1976, upaya delegasi Jepang untuk melunakkan kecaman terhadap Indonesia sangat mencolok.¹⁶⁶

291. Resolusi 384 adalah satu-satunya resolusi PBB yang didukung oleh Jepang setelah invasi Indonesia. Jepang bersikap abstain dalam Resolusi Dewan Keamanan 389 pada April 1976, menyatakan bahwa Jepang percaya Dewan Keamanan harus mengakui bahwa Indonesia sudah mulai menarik pasukannya dari Timor-Leste, sesuai permohonan dalam resolusi sebelumnya. Pada 15 April 1976, wakil Jepang, Kanazawa, berkata kepada Dewan Keamanan:

Walaupun tampak oleh kami bahwa perdamaian dan ketertiban di wilayah Timor belum sepenuhnya pulih, menurut pendapat kami merupakan hal yang baik bahwa perjuangan bersenjata sekarang tampak lebih terbatas pada daerah-daerah terpencil di wilayah itu, dan bahwa kehidupan rakyat sedikit demi sedikit kembali normal.¹⁶⁷

292. Kanazawa menyambut pernyataan Indonesia kepada Dewan Keamanan, “bahwa para sukarelawan bersenjata sudah mulai meninggalkan wilayah Timor pada Februari, dan bahwa proses penarikan diri diharapkan akan selesai dalam waktu singkat.”

293. Pernyataan Indonesia bahwa invasi terdiri atas “para sukarelawan” tidak lebih dapat dipercaya dibanding dengan pernyataannya untuk mundur. Pada saat itu kedua pernyataan tersebut diketahui tidak benar. Atase Pertahanan Selandia Baru di Jakarta memberitahu pemerintahnya pada Januari 1976 bahwa pernyataan mengenai “sukarelawan” merupakan “rekaan konyol”, dan ia mengatakan:

Pengelakan dan kebenaran yang setengah-setengah merupakan ciptaan diplomatik yang diterima, tetapi kebohongan yang terang-terangan tidak mudah dimaafkan.¹⁶⁸

294. Lapornya pada periode Januari - Maret 1976 tidak menyebutkan perihai penarikan diri, dan mengatakan bahwa “situasi militer masih begitu tidak stabil,

sehingga mengharuskan adanya tentara Indonesia dalam jumlah yang besar [di Timor-Leste] ...”¹⁶⁹ Utusan PBB, Winspeare Guicciardi, juga skeptis terhadap pernyataan Indonesia. Dalam laporan keduanya mengenai Timor-Leste, yang ditulis tujuh bulan setelah invasi pada Juni 1976, ia menulis bahwa ketika dia mengangkat isu yang menyangkut Resolusi Dewan Keamanan 384 dan 389, Indonesia dengan mudahnya mengulangi pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa penarikan “sukarelawan Indonesia” akan selesai dalam waktu singkat.¹⁷⁰ Dalam perkembangan selanjutnya, wakil Indonesia di PBB mengatakan kepada rekan Amerikanya bahwa Indonesia harus menghormati keinginan Pemerintahan Sementara Timor Timur, yang tidak menginginkan penarikan pasukan bersenjata, dan ia bertanya: “Bagaimana caranya Indonesia bisa ditarik mundur dari wilayah yang sudah digabungkan ke dalam Indonesia?”¹⁷¹

295. Dalam pernyataan-pernyataan lain kepada Dewan Keamanan, Kanazawa mendukung hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, dan meminta kelanjutan usaha untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban serta perpanjangan mandat Perwakilan Khusus. Walaupun positif, usulan-usulan ini telah pernah disetujui oleh Indonesia sebelumnya, dan tidak ada tambahan baru atau yang sepadan dengan kapasitas Jepang—sebagai investor dan donor utama Indonesia—untuk memengaruhi jalannya kejadian.

296. Jepang menentang delapan Resolusi Sidang Umum PBB mengenai Timor-Leste antara 1975 dan 1982. Ini termasuk resolusi 1982 yang lemah, yang menyerahkan isu tersebut kepada Sekretaris Jenderal untuk menemukan penyelesaian melalui dialog. Selama kunjungannya ke Dili pada 1976, Winspeare Guicciardi melihat poster-poster yang mengungkapkan perasaan terimakasih kepada Jepang atas pemberian suara yang mendukung Indonesia di PBB.¹⁷²

297. Menurut Pemerintah Australia, Jepang secara implisit mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste pada 1982, ketika Jepang menandatangani persetujuan pajak dengan Indonesia yang persyaratannya tidak mengeluarkan Timor-Leste dari wilayah Indonesia.¹⁷³ Jepang menyangkal bahwa ia secara formal mengakui penggabungan itu. Jepang pun tidak menghadiri Majelis Rakyat Timor Timur pada 31 Mei 1976, saat petisi untuk integrasi dinyatakan oleh Indonesia sebagai tindakan penentuan nasib sendiri yang sah.¹⁷⁴ Pada 1991, Parlemen Jepang mengatakan kepada PBB:

Pemerintah Jepang tidak pernah mengakui secara formal penggabungan Timor-Leste oleh Indonesia. Posisi resmi Jepang adalah sebagai berikut: “Posisi dasar kami berkaitan dengan daerah Timor-Leste adalah bahwa Jepang terus mengawasi proses negosiasi antara pihak-pihak yang berkepentingan di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB” dan

.....
* Indonesia mengundang Jepang untuk hadir di Majelis Rakyat Timor Timur 31 Mei 1976. Dalam telegram pada 28 Mei 1976, seorang pejabat Kedutaan Inggris di Tokyo mengomentari masalah itu: “Orang Jepang sedang berada dalam dilema yang tidak asing. Di satu sisi mereka lebih baik tidak ada hubungannya dengan undangan itu, namun di sisi lain mereka takut mengecewakan orang-orang Indonesia. Mereka tidak ingin diwakili di Dili jika mereka tidak bersama kelompok yang baik...”, dalam *UK unclassified documents*, Dowson Files 7.19.

bahwa “kami tidak berhak menghakimi mengenai yurisdiksi pulau tersebut”. Karena itu, pemerintah Jepang telah menginstruksikan para penerbit buku-buku sekolah untuk menggambarkan jenis garis yang sama antara Timor Timur dan Timor Barat seperti garis yang digambarkan antara Maroko dan Sahara Barat. Garis sejenis itu menunjukkan bahwa terjadi sebuah konflik internasional yang statusnya belum diselesaikan. Forum Anggota Diet telah berkali-kali menegaskan posisi ini melalui pertanyaan-pertanyaan pada mimbar Diet dan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada pemerintah.”¹⁷⁴

298. Faktor penentu utama posisi Jepang terhadap isu Timor pada 1970-an dan 1980-an adalah hubungan ekonominya dengan Indonesia. Setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua, Jepang memusatkan fokusnya pada pembangunan kembali ekonominya, yang hanya memiliki sumberdaya alam yang rendah dan sangat bergantung pada jasa hubungan internasional. Tujuan-tujuan ekonomi ini mendikte kebijakan luar negerinya yang low profile, dan yang pada dasarnya sejajar dengan kebijakan AS.

299. Indonesia dan Jepang membangun hubungan diplomatik resmi pada 1957, setelah negosiasi yang berlarut-larut mengenai reparasi perang Jepang kepada Indonesia akibat pendudukannya terhadap bekas koloni Belanda ini antara 1942 dan 1945. Setelah itu menyusul pula perluasan investasi Jepang, eksploitasi, dan bantuan sumberdaya alam. Indonesia, yang memiliki pasar yang sangat luas, sumberdaya alam, dan lokasi strategis, menjadi sangat penting bagi perekonomian Jepang, terlepas dari siapa memegang kekuasaan di Jakarta. Persentase persediaan minyak dan perdagangan Jepang yang signifikan mengalir melewati Selat Malaka. Setelah rezim Soeharto mengambilalih kekuasaan, Jepang memberi bantuan dalam pembangunan konsorsium bantuan internasional, Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang mengadakan pertemuan pertamanya di Tokyo pada 1967. Sejak 1980-an, Jepang merupakan investor dan donor Indonesia yang terbesar, serta sangat melindungi hubungan tersebut. Tanggapan Jepang terhadap Timor-Leste dibatasi oleh prioritas-prioritas ini.

300. Pada 1979, Jepang memberi 100 juta yen kepada program peringanan kelaparan gabungan Palang Merah Indonesia – Palang Merah Internasional di Timor-Leste. Pada 1991, Pemerintah Jepang memutuskan membuat hak asasi manusia dan faktor-faktor lain, seperti pengeluaran militer oleh negara penerima, sebagai pertimbangan dalam mengalokasikan program bantuannya yang besar-besaran. Forum Anggota Diet Jepang untuk Timor-Leste menyambut inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa “jika kriteria ini diterapkan secara jujur untuk Indonesia, yang merupakan penerima nomor satu Overseas Development Assistance [ODA; Bantuan Pembangunan Seberang Lautan] Jepang, diskusi mengenai isu Timor Timur tidak dapat dihindari.”¹⁷⁵ Hal ini tidak terjadi. Pemerintah Jepang mengelak dari komitmen penting ini dengan menandatangani Deklarasi Bangkok mengenai Hak Asasi Manusia pada 1993, yang menyatakan bahwa bantuan seharusnya tidak dihubungkan dengan hak asasi manusia. Walaupun menilai catatan domestik hak

asasi manusia Jepang sebagai yang terbaik di Asia Timur, Kenneth Christie dan Denny Roy menyimpulkan bahwa:

Dalam praktik, pemasyarakatan hak asasi manusia bukan faktor yang penting dalam bantuan pembangunan luar negeri Jepang.¹⁷⁶

301. Pada 1990-an, Jepang tergerak memainkan peran yang relatif lebih positif dalam permasalahan Timor-Leste. Hal ini dilakukan sebagian besar karena perkembangan di Timor-Leste dan tekanan domestik, terutama dari salah satu lembaga masyarakat dan anggota-anggota Diet Jepang, yang berkomitmen menjunjung tinggi hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri.*

302. Sebuah contoh pembelaan masyarakat sipil adalah kesaksian kepada Komite Khusus Dekolonisasi pada 1987 oleh Iwamura Shouhachi, mantan perwira angkatan bersenjata yang bertugas di Timor-Leste dari 1942 sampai 1945. Dalam presentasinya ia meminta kepada Indonesia untuk tidak mengulangi kesalahan yang dibuat Jepang selama Perang Dunia Kedua, dan untuk memperkenankan penentuan nasib sendiri yang benar:

Di Jepang saya hanya seorang warganegara tua. Tetapi saya bertekad tidak pernah melupakan kejahatan yang dilakukan oleh Jepang dalam Perang Dunia Kedua, dan bertindak menurut apa yang telah saya pelajari dari pengalaman pahit.

303. Dengan menitikkan air mata, ia berkata kepada Komite:

Sangat menyakitkan untuk sekarang berbicara mengenai pengorbanan dan beban yang kami paksakan atas rakyat Timor, sebuah bangsa yang tidak ada hubungannya dengan perang itu... Pemerintah Jepang tidak pernah meminta maaf atau membayar reparasi kepada rakyat Timor, untuk apa yang telah dilakukannya di sana dalam Perang Dunia Kedua: seharusnya Jepang melakukannya.[†]

* Suster Monica Nakamura mengatakan kepada Komisi bahwa tujuan utama Free East Timor Japan Coalition, jaringan payung nasional Jepang yang utama, adalah "untuk mendukung hak atas penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Mengenai bantuan kemanusiaan, kami [menyediakan hal itu] dalam beberapa kesempatan tetapi kami terpusat pada isu penentuan nasib sendiri." Audiensi publik nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004. Koalisi tersebut mencakup sekitar 40 kelompok di seluruh negara.

† 13 Agustus 1987, diberitakan dalam *The Australian*, 15 Agustus 1987. Sekutu-sekutu dan Jepang menduduki Timor Portugis dari 1942 sampai 1945 dengan melanggar kenetralan Portugis. Tentara-tentara Jepang tanggung jawab atas sejumlah besar kematian, pelanggaran terhadap perempuan, dan kerusakan fisik. Menurut sebuah survei di Timor-Leste pada 1996, kira-kira 700 perempuan Timor dijadikan budak seks untuk tentara Jepang. (*Japan Times*, 14 Desember 2002). Sejak perang itu, Jepang telah membayar reparasi kepada tetangga sekitarnya untuk meringankan reintegrasinya ke dalam wilayah itu dan meminta maaf secara eksplisit atas agresi dan pelanggaran pada masa peperangan. Indonesia menerima USD223 juta dari Jepang, ditambah USD400 juta untuk bantuan dan pembatalan utang perdagangan sebanyak USD177 juta. Timor-Leste tidak diganti kerugiannya akibat peperangan karena Portugal, dengan sikapnya yang netral selama peperangan, bukan salah satu penandatanganan Konferensi San Fransisco 1951 yang menentukan kewajiban reparasi Jepang. Organisasi non-pemerintah Jepang

304. Pada 1995, sehubungan dengan tekanan domestik yang gigih serta perkembangan di Timor-Leste, Pemerintah Koalisi Sosialis/LDP Murayama mengubah posisi Jepang dari pengamat lepas menjadi pendukung proses PBB. Pada konferensi APEC 1995 dan 1996, Menteri Luar Negeri Jepang memberitahu rekan Indonesianya, Ali Alatas, mengenai minat Jepang untuk mencari penyelesaian isu itu secara damai dan cepat, melalui jasa baik Sekretaris Jenderal PBB.⁷ Perubahan kebijakan ini juga membuka jalan bagi Jepang untuk menyediakan sumber dana untuk proses PBB, termasuk All-Inclusive intra-East Timorese Dialogue (AIETD), di mana Jepang menyumbang sebanyak USD100.000 pada 1996.

305. Pada saat yang sama, Jepang dengan berhati-hati memisahkan isu itu dari hubungan ekonominya dengan Indonesia. Meskipun hampir setengah dari anggota Diet Jepang menandatangani petisi yang mengecam militer Indonesia atas pembantaian Santa Cruz pada 1991, pemerintah Jepang menahan diri untuk tidak memberi kecaman langsung, dan membatasi tanggapannya pada penyesalan belaka. Jepang tidak memberi tanggapan resmi pada penyerahan Penghargaan Nobel Perdamaian kepada Uskup Carlos Belo dan José Ramos-Horta pada 1996. Ketika José Ramos-Horta mengunjungi Jepang pada Januari 1997 atas undangan kelompok masyarakat sipil, Menteri Luar Negeri tidak dapat bertemu dengannya.⁸ Surat kabar Jakarta Post memberitakan bahwa Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto, yang sedang mengunjungi negara-negara ASEAN untuk mendiskusikan krisis ekonomi Asia, memberitahu Presiden Soeharto bahwa tidak ada pejabat senior Jepang yang akan bertemu dengan José Ramos-Horta.⁹

306. Menyusul keputusan Kofi Annan pada 1997 untuk menguatkan masalah Timor-Leste, Jepang adalah salah satu dari kelompok utama lima negara yang dukungannya diakui oleh Jamsheed Marker, Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal untuk Timor-Leste.¹⁰ Pemerintah Jepang mendukung keputusan Presiden Habibie untuk memperkenankan dilakukannya pemilihan suara di Timor-Leste serta Jajak Pendapat yang diatur oleh PBB, yang diadakan pada 30 Agustus 1999. Setelah pemilihan, Jepang meminta agar hasil dari pemilihan itu dihargai oleh semua

dan Gereja Katolik Jepang terus menuntut permintaan maaf resmi dan reparasi, termasuk dari Dana Perempuan Asia yang dibentuk pada 1995 oleh Perdana Menteri Tomiichi Murayama, dan telah membantu korban-korban orang Timor untuk bersaksi di Tokyo.

* Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Jepang Kono dan Ali Alatas dilangsungkan selama pertemuan Osaka APEC pada November 1995 ketika pemuda Timor sedang mencari suaka di kedutaan besar Jepang di Jakarta. Pertemuan 1996 antara Menteri Luar Negeri Yukihiko Ikeda dan Ali Alatas itu terjadi di Filipina setelah Penghargaan Nobel Perdamaian diberikan kepada Uskup Belo dan José Ramos-Horta.

† José Ramos-Horta diberitahu bahwa Menteri Luar Negeri sedang sibuk mengatur situasi darurat di Peru ketika para militan menduduki Kedutaan Jepang.

‡ Hubungan perekonomian Jepang-Indonesia mengalami kemunduran pada 1997 bukan karena negara Timor-Leste, melainkan karena mobil "Timor". Ketika Presiden Soeharto menyerahkan hal monopoli untuk mobil Indonesia baru yang dinamakan "mobil Timor", Jepang menganggap langkah itu merusak minat terhadap mobil Jepang di Indonesia. Protes pun dilayangkan kepada Organisasi Perdagangan Dunia dan menimbulkan kemarahan Presiden Soeharto.

§ Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal memuji sumbangan Duta Besar Yukio Takasu. (*Jamsheed Marker*, hal. 14, 74).

pihak, dan agar Indonesia “memenuhi tanggungjawabnya atas keamanan (dan) mengambil semua langkah yang diperlukan” untuk mengendalikan para milisi.¹⁷⁷ Jepang mengumumkan bantuannya sebanyak mungkin untuk peralihan itu, namun menolak menghentikan bantuan kepada Indonesia sebagai balasan atas tindak penghancurannya, dan memperingatkan negara-negara donor lainnya bahwa penghentian bantuan dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil dan menghambat pemulihan ekonomi Asia Timur. Jepang tidak diperbolehkan oleh konstitusinya untuk menyumbangkan pasukan kepada Pasukan Internasional untuk Timor-Leste (International Force for East Timor, Interfet). Namun, Jepang menjadi donor utama bagi Interfet, dengan menyumbang USD100 juta, agar pasukan dari negara-negara berkembang dapat berpartisipasi. Sehubungan dengan usaha-usaha sebelumnya, Jepang juga memberi bantuan yang sangat banyak untuk memenuhi biaya kemanusiaan dan rekonstruksi di Timor-Leste.’

Kesimpulan

307. Jelas dari pengamatan di atas bahwa selama sebagian besar periode mandat, tanpa memandang ideologi, lokasi, atau tanggungjawab dalam tatanan internasional, kekuatan-kekuatan utama dunia sedikit banyak memiliki sikap yang sama terhadap masalah Timor-Leste. Dengan Cina sebagai pengecualian, selama tahun-tahun awal pendudukan Indonesia, pemerintahan dengan berbagai corak politik di Eropa, Asia, dan Amerika Utara jauh lebih banyak memberi dukungan kepada Indonesia daripada Timor-Leste. Beberapa dari pemerintah-pemerintah ini bekerja lebih keras daripada yang lainnya untuk mendukung dan mengonsolidasi kehadiran Indonesia. Namun, mereka yang memberi suara mendukung Timor-Leste di PBB juga terus memprioritaskan hubungan mereka dengan Indonesia, dan tidak bersikap aktif dalam memberi dukungan untuk penentuan nasib sendiri di luar PBB.

308. Sikap ini ditunjukkan oleh banyak anggota PBB lainnya. Pemerintah negara-negara Barat seperti Kanada dan Selandia Baru serta pemerintah negara-negara Asia seperti India, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand, semua sangat berpihak kepada Indonesia. Secara umum, satu-satunya pengecualian yang mencolok adalah Portugal, bekas koloni-koloninya di Afrika, dan beberapa negara kecil.

309. Sikap resmi internasional mengenai masalah Timor-Leste diwarnai oleh pola pikir yang muncul pada masa Salazar, dan dikembangkan lebih jauh serta semakin mengakar pada 1970-an. Pemikiran ini bersifat sangat negatif dan sangat merugikan aspirasi dan hak-hak rakyat Timor. Pemerintah negara-negara mengakui hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan menyatakan bahwa mereka tidak mendukung cara Indonesia melakukan penggabungan, tetapi tujuan umum

.....
* Ini termasuk USD2 juta untuk para pengungsi Timor dan sumbangan yang sangat besar untuk Trust Fund (TFET) yang dibentuk untuk rekonstruksi Timor-Leste. Siaran Pers Departemen Luar Negeri Jepang, 4 Oktober 1999.

dari pendekatan mereka, kalau bukan niat mereka, adalah untuk melegitimasi dan mengonsolidasi pengambilalihan Indonesia. Aspek-aspek utama pola pikir ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Kemerdekaan bagi Timor Timur tidak mungkin atau tidak diinginkan. Pandangan bahwa negara Timor merdeka tidak dapat berkembang secara ekonomi, sosial, atau politik, dianggap sudah jelas dengan sendirinya pada periode 1960-an, dan secara luas beredar dalam kalangan resmi di Portugal, Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat pada saat itu. Hal ini menjadi dogma pada tahun 1970-an, dan setelah Fretilin muncul diwarnai pula oleh pandangan bahwa negara kecil yang lemah dalam kepulauan Indonesia akan menjadi ancaman bagi stabilitas regional. Namun, sangat mungkin bahwa negara Timor merdeka yang dipimpin oleh UDT juga tidak akan dapat diterima.[†]
2. Setengah dari Pulau Timor di bagian timur secara alami merupakan bagian Indonesia. Pandangan ini dipromosikan sebagai sesuatu yang jelas kepada siapapun yang mempelajari lokasi Timor di peta dalam hubungannya dengan Indonesia. Presiden Soeharto dan rakyat Timor pendukung integrasi menegaskan bahwa dalam pandangan mereka, bangsa Timor Timur dan Indonesia adalah saudara dan bahwa integrasi adalah reuni yang “alamiah” setelah berabad-abad dipisahkan oleh kolonialisme Eropa.[‡] Para penyusun kebijakan Barat juga memilih menggambarkan integrasi, dalam kata-kata Henry Kissinger, sebagai “evolusi normal setelah akhir kekuasaan kolonial”.¹⁷⁸
3. Indonesia dipaksa oleh keadaan untuk turut campur. Sejak 1960-an, Indonesia terus menyampaikan kepada masyarakat internasional bahwa ia tidak memiliki klaim legal atau ambisi teritorial atas Timor Portugis. Penggabungan Timor-Leste akan lebih merupakan “reaksi defensif ketimbang sebuah keharusan nasionalis”.¹⁷⁹ Selain menyebutkan alasan keamanan, Indonesia juga mencoba memberi pembenaran pada pengambilalihannya atas dasar kemanusiaan. Jusuf Wanandi, penasihat Presiden Soeharto, mengatakan kepada pers Kanada pada 1984:

* Setelah mengunjungi wilayah itu pada awal 1978 setelah pengambilalihan Indonesia, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Roger Peren, menuliskan: “Kesimpulannya, rakyatnya miskin, kecil, dijangkiti penyakit, dan hampir semuanya tidak bisa baca-tulis, sangat sederhana, dan, seperti yang berulang kali diberitahukan kepada kami, ‘primitif’... ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan ketika menilai kapasitas mereka untuk mengambil bagian dalam suatu tindakan penentuan nasib sendiri, atau bahkan bertindak sebagai warga negara yang tanggung jawab dari sebuah negara merdeka.” 13 Januari 1978, NZ...OIA Material, Volume 1.

† Pandangan ini semakin diterima di Indonesia dan menjelaskan rasa “sakit” di beberapa bagian ketika rakyat Timor-Leste memilih kemerdekaan dari Indonesia. Lihat, contoh, buku Lela E Madjiah yang berjudul *Timor Timur: Perginya Si Anak Hilang*, Pustaka Antara Utama, Jakarta, 2002. Melaporkan kematian Jenderal Benny Moerdani pada 2004, David Jenkins menuliskan: “Moerdani selalu menganggap Timor-Leste berada dalam Indonesia, dan menelan kepahitan ketika pada 1999 Presiden Habibie, yang selalu tidak ia sukai, memperkenankan Timor-Leste memilih keluar dari republik itu”. *Sydney Morning Herald*, 10 September 2004.

Kami bangun pada suatu hari, dan menyadari adanya kekacauan tepat di depan pintu kami. Portugis telah meninggalkan kekosongan...Tempat itu sangat kacau. Saya pikir kami kurang-lebih dipaksa untuk melakukan apa yang telah kami lakukan.¹⁸⁰

Klaim ini didengungkan secara internasional selama masa konflik. Bahkan, pada 1995 Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Don McKinnon, menyangsikan bahwa penggabungan Indonesia bisa disebut sebagai 'invasi', dan mengatakan bahwa Indonesia turut campur karena adanya "masalah pengungsi yang besar", dan untuk "mendukung pihak yang lemah" dalam sebuah perang saudara.¹⁸¹

4. Secara politik, Fretilin tidak dapat diterima ataupun sah. Indonesia dan rakyat Timor yang prointegrasi mendorong sentimen anti-Fretilin dengan mengutuk Fretilin sebagai komunis, teroris, tak representatif, dan haus kekuasaan. Meskipun negara-negara Barat dan pejabat-pejabat lainnya tidak setuju dengan kebanyakan klaim Indonesia, pemerintah banyak negara sering bersikap menentang Fretilin dan menolak berhadapan dengan wakil-wakilnya, walaupun PBB menerima Fretilin sebagai jurubicara yang sah bagi Timor-Leste.
5. Pendudukan Indonesia tidak dapat diubah. Hal ini dianggap jelas secara matematis karena jumlah kekuatan Indonesia yang sangat dominan; dan istilah "tidak dapat diubah" muncul kembali bagaikan mantra, dalam pernyataan-pernyataan resmi yang dilayangkan selama bertahun-tahun.* Banyak pemerintah memberi suara menentang resolusi mengenai Timor-Leste di PBB dengan dasar bahwa kedaulatan Indonesia merupakan sesuatu yang sudah diputuskan (*fait accompli*). Untuk alasan yang sama, mereka memperkecil masalah itu secara internasional menjadi masalah bilateral kecil antara Portugal dan Indonesia, yang penyelesaiannya harus dibantu oleh PBB.

Vatikan[†]

Pendahuluan

310. Gereja Katolik merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam persoalan Timor-Leste selama mandat Komisi periode 1974 - 1999. Perjuangan dekolonisasi berdampak berat pada Gereja dan melibatkan semua kalangan, mulai

* Jill Jolliffe terbukti benar ketika ia mengamati pada 1978 bahwa "satu-satunya yang tidak bisa diubah tentang Timor Timur adalah pembunuhan." *East Timor: Nationalism and Colonialism*, University of Queensland Press, 1978, hal. 304.

† Komisi telah mencatat berbagai sumber untuk bagian ini, termasuk kesaksian langsung yang diungkapkan kepada CAVR. Komisi ingin memberikan penghargaan khusus kepada Arnold Kohen dan Pastor Patrick Smythe atas submisi dan saran mereka. Arnold Kohen adalah penulis *From the Place of the Dead – Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, Lion Publishing, 1999. Patrick A. Smythe adalah penulis *The Heaviest Blow – The Catholic Church and the East Timor Issue*, Lit Verlag Munster, 2004.

dari akarrumpun hingga eselon teratas hierarki Gereja di Roma. Pentingnya isu ini bagi Gereja dan kepentingan politik Vatikan atas pemerintah Indonesia jelas tampak dari fakta bahwa Paus Yohanes Paulus II adalah satu-satunya pemimpin dunia yang mengunjungi wilayah Timor-Leste selama masa pendudukan Indonesia. Bagian ini mengupas bagaimana Vatikan menanggapi dukungan kuat Gereja lokal terhadap rakyat Timor-Leste dalam hak penentuan nasib sendiri bagi warga.

Latar belakang keterlibatan Vatikan

311. Vatikan memiliki pengaruh dan jangkauan yang penting, baik secara langsung melalui jalur-jalur resminya maupun secara tidak langsung melalui keanggotaan sekitar satu miliar umat dan jaringan institusinya, yang banyak di antaranya ditempatkan secara strategis. Berpusat di Roma dan dipimpin oleh Sri Paus, Vatikan merupakan otoritas pusat Gereja Katolik Romawi. Aktivitas politik dan diplomatik Vatikan diatur oleh Menteri Luar Negeri, jabatan terpenting di bawah Paus. Vatikan memiliki hubungan diplomatik formal dengan sebagian besar negara, dan mempertahankan kira-kira 100 misi diplomatik permanen di luar negeri. Misi diplomatik ini meliputi Washington, Lisbon, Canberra, dan Jakarta, di mana perwakilan Vatikan dibuka pada 1965. Vatikan (atau 'Takhta Suci') mempunyai misi pengamat tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1964; karena itu, Vatikan memiliki suara dalam keputusan-keputusan PBB, tetapi tidak memiliki hak suara. Vatikan juga memiliki hubungan diplomatik dengan Uni Eropa dan sebagian besar badan-badan khusus PBB. Stasiun radio resminya, Radio Vatikan, didengar luas di Eropa. Surat kabar semi-resmi Vatikan, *L'Osservatore Romano*, diterbitkan setiap hari dalam bahasa Italia, dan setiap minggu dalam bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Jerman, dan Prancis.

312. Konsili Vatikan Kedua, yang berakhir sepuluh tahun sebelum invasi Indonesia, memerintahkan agar jaringan dan sumberdaya Vatikan harus digunakan untuk melayani kebenaran, perdamaian, dan keadilan, khususnya bagi mereka yang miskin dan papa. Gereja dan negara mempunyai peran yang berbeda, dan Gereja Katolik, meskipun sangat sentralistik, tidaklah monolitik. Sebagai pusat institusi global, Vatikan berhadapan dengan banyak dilema dan tekanan kebijakan dari kepentingan yang bertentangan, baik di dalam maupun di luar komunitas Katolik. Di sisi lain, benarlah bahwa Vatikan memiliki sumberdaya dan pengaruh penting dan, khususnya dalam kasus Timor-Leste, memiliki informasi yang lengkap tentang situasi dan aspirasi Gereja lokal, yang dianggap menjadi tanggungjawab langsung Vatikan.

Gereja Katolik di Timor-Leste

313. Gereja Katolik di Timor-Leste memiliki tiga pemimpin selama periode 1974-1999: Uskup José Joaquim Ribeiro, Dom Martinho da Costa Lopes, dan Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB. Selama pendudukan Indonesia, setiap pemimpin ini awalnya berusaha mengakhiri kekerasan melalui dialog dan perwakilan langsung kepada otoritas sekuler. Ketika upaya ini gagal, mereka masing-masing beralih

mengambil peran yang semakin vokal untuk melindungi hak rakyat. Sejak sekitar 1983, Gereja mengimbau adanya penentuan nasib sendiri, karena yakin bahwa penentuan hak kolektif tersebut merupakan kunci untuk mencapai perdamaian sejati dan dinikmatinya hak-hak individu. Peranan profetik Gereja lokal ini, dan advokasinya untuk hak politik atas penentuan nasib sendiri, merupakan tantangan terbesar bagi Vatikan dalam masalah Timor-Leste, meskipun Vatikan pada prinsipnya juga mendukung hak penentuan nasib sendiri.

Dom José Joaquim Ribeiro (1966-77)

314. Uskup Ribeiro yang berkebangsaan Portugis memimpin Gereja selama dua tahun terakhir pemerintahan Portugis, dan selama dua tahun pertama pendudukan Indonesia.

315. Sebelum invasi Indonesia, peran dan status Gereja di Timor-Leste ditentukan dalam Konkordat 1940 antara Vatikan dan Portugal. Berdasarkan kesepakatan ini, Gereja di Timor-Leste menikmati beberapa keistimewaan termasuk subsidi negara, pengecualian pajak, dan hibah tanah yang luas. Gereja juga tanggung jawab atas pendidikan dan merupakan agen utama “misi pemberadaban” Portugal.^{*} Hubungan istimewa ini berakhir dengan terjadinya Revolusi Anyelir di Portugal. Sebagai bagian integral sistem kolonial kuno, Gereja benar-benar ditantang oleh perubahan lingkungan politis. Suatu periode kebimbangan serta kegelisahan akut pun menyusul, diperparah oleh kekerasan perang saudara dan bayangan invasi Indonesia.

316. Di Timor-Leste, program Fretilin mencakup kritik terhadap peran Gereja dalam masa kolonialisme dan kepemilikan Gereja atas lahan-lahan luas. Beberapa pejabat Gereja dan pastor lebih berpihak pada UDT karena mengkhawatirkan tersebarnya paham komunisme di wilayah mereka. Uskup Ribeiro secara terbuka menuduh Fretilin sebagai “komunis”. Dalam Surat Gembala yang dikeluarkan pada 25 Januari 1975, ia melarang umat Katolik memilih Komunis atau Sosialis, tetap membela hak atas properti pribadi, dan memperingatkan bahwa Marxisme mengancam “menghilangkan nilai-nilai positif rakyat Timor”.[†] Meskipun kemudian diubah, pandangan-pandangannya memengaruhi persepsi Gereja tentang Fretilin dan sikap Vatikan serta beberapa negara yang menerima pengungsi perang saudara di Timor-Leste, khususnya Indonesia, Portugal, dan Australia.

* Dalam situasi gejolak pemikiran Gereja di seputar Konsili Vatikan Kedua (1962-1965) dan gerakan pembebasan di Afrika, beberapa misionaris memanfaatkan perannya sebagai pengajar untuk mengkritik kolonialisme dan mengenalkan murid-murid mereka kepada ide-ide baru. Hal ini secara nyata dilakukan oleh seminari di Dare yang dikelola Yesuit, yang menjadi alma mater banyak pemimpin nasionalis masa depan.

† Patrick A. Smythe, *'The Heaviest Blow' – The Catholic Church and the East Timor Issue*, Lit Verlag, Münster, 2004, hal. 36. Uskup Atambua di Timor Barat, Indonesia, Theodore van den Tillart SVD, juga menggambarkan Fretilin sebagai Marxis kepada Kardinal Knox dari Australia dan berkata bahwa Fretilin mendapat bantuan dari gerakan komunisme internasional serta bersalah atas pelanggaran hak-hak asasi manusia yang meluas. Kardinal Knox kemudian bertugas di Vatikan. Smythe, 72.

317. Invasi dan aneksasi Indonesia atas Timor-Leste terjadi menjelang akhir masa kepausan Paus Paulus VI (1963 - 1978). Paulus VI memainkan peran utama dalam pembentukan dan penerapan perubahan yang diperkenalkan Konsili Vatikan, termasuk doktrin Konsili tentang keadilan sosial. Ia sangat menentang kekerasan dan memberikan pidato tak terlupakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1963, saat ia mendeklarasikan “tak ada perang lagi, perang tak akan ada lagi” (“*no more war, war never again*”).¹⁸² Menteri Luar Negeri Vatikan, Jean-Marie Cardinal Villot (1969-79), mengetahui dengan baik invasi tersebut, serta akibat-akibat kemanusiaannya, dari beberapa sumber. Hal ini juga berlaku pada Uskup Ribeiro, yang berharap intervensi militer Indonesia akan berjalan setenang aksi India di Goa; tapi ia benar-benar terganggu dengan apa yang ia saksikan. Pada awal 1976 ia berkata kepada pemerintah Indonesia bahwa “pasukan Indonesia, dengan pembunuhan, pelanggaran, dan penjarahan yang dilakukannya, ribuan kali lebih buruk” (daripada Fretilin); dan menambahkan, bahwa “pasukan terjun payung Indonesia turun dari langit seperti malaikat tetapi kemudian berperilaku seperti setan”.¹⁸³ Ribeiro terus melakukan protes hingga, karena kecewa, mengundurkan diri ke Portugal pada 1977.

318. Meskipun demikian, Komisi belum bisa mendapatkan bukti bahwa Paus Paulus VI membuat tanggapan umum mengenai invasi tersebut, atau menggunakan jabatannya untuk memperkuat tuntutan Dewan Keamanan PBB tentang penarikan pasukan Indonesia.

319. Duta Besar Vatikan di Jakarta, Vincenzo Farano (1974-80), juga menerima banyak informasi. Ia percaya bahwa Gereja tidak perlu takut akan berintegrasinya Timor-Leste dengan Indonesia. Tetapi, seperti halnya Uskup Ribeiro, ia terkejut dengan adanya kekerasan. Untuk menanggapi hal tersebut secara pribadi, ia menyediakan bantuan medis dan melakukan kunjungan berkala ke Timor-Leste, termasuk berkunjung ke wilayah yang dikuasai Fretilin dan ke tempat-tempat pengungsian para pengungsi perang saudara di Timor Barat. Meskipun berada lebih jauh, Wakil Paus di Australia juga mengetahui perkembangan di Timor-Leste dari media dan sumber-sumber seperti Komisi Katolik Australia untuk Keadilan dan Perdamaian, yang mengeluarkan serangkaian pernyataan tentang Timor-Leste pada 1975 dan 1976.

Dom Martinho da Costa Lopes (1977-83)

320. Uskup Ribeiro mengundurkan diri pada 23 Oktober 1977. Karena kasus Timor-Leste yang tidak jelas, Vatikan kemudian mengambilalih pengelolaan Gereja lokal secara langsung, ketimbang menggabungkannya dengan Gereja Indonesia. Setelah berkonsultasi dengan pemimpin agama setempat, Vatikan menunjuk Dom Martinho da Costa Lopes sebagai Administrator Apostolik dan menjadikannya putra asli Timor pertama yang menjadi pemimpin Gereja Katolik di Timor-Leste. Ia langsung tanggung jawab kepada Vatikan melalui Duta Besar Vatikan di Jakarta.*

* Monsignor Lopes tidak ditahbiskan sebagai uskup, tetapi karena posisinya, orang-orang Timor-Leste biasanya menganggapnya sebagai uskup.

321. Secara politik pengaturan ini penting. Hal ini menunjukkan dukungan Vatikan terhadap proses PBB tentang penentuan nasib sendiri, bukannya terhadap klaim Indonesia bahwa status politik wilayah ini telah diputuskan. Diwawancarai di Roma pada 1980, para pejabat Vatikan menyatakan bahwa mereka menganggap Timor-Leste sebagai “negeri terjajah” tempat tidak ada tindak nyata untuk mendorong penentuan nasib sendiri. Mereka menambahkan bahwa Vatikan tidak akan mengakui Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia, sampai jelas bahwa hal itu merupakan keputusan rakyat Timor-Leste yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁸⁴ Sejalan dengan kebijakan ini, Vatikan mempertahankan tanggungjawab langsung atas Gereja lokal sepanjang masa konflik, dan dengan demikian memberi perlindungan serta akses internasional bagi para pejabatnya, dan menolak tekanan dari Indonesia untuk melakukan integrasi eklesiastis.* Namun, Vatikan tidak mengumumkan ataupun memajukan posisinya secara internasional. Sangat sedikit umat Katolik atau publik internasional umum yang mengetahui bahwa Vatikan mendukung hak warga atas penentuan nasib sendiri.

322. Masa jabatan Monsignor Lopes cukup singkat. Selama tiga tahun pertama, ia menerapkan pendekatan kooperatif dalam pembicaraannya dengan otoritas Indonesia mengenai banyak pelanggaran yang dilaporkan oleh para pastor dan pihak-pihak lain kepadanya. Ia juga selalu memberi informasi baru kepada para uskup Indonesia dan Wakil Paus di Jakarta. Komisi tidak berhasil menemukan catatan apapun bahwa Vatikan membuat intervensi publik atau peranan yang mendukung selama periode ini.

323. Sejak 1981, hubungan Monsignor Lopes dengan Vatikan dan militer Indonesia memburuk, dan pada April 1983 ia mengundurkan diri di bawah tekanan dari kedua pihak tersebut. Alasan retaknya hubungan dengan Vatikan berkaitan dengan perbedaan pandangan yang mendasar tentang isu Timor-Leste dan bagaimana menanganinya. Masa ini merupakan periode krisis yang hebat setelah kekalahan besar Resistansi, kelaparan, dan, pada pertengahan 1981, penyerangan militer baru terhadap Fretilin. Vatikan juga prihatin bahwa meningkatnya keterlibatan Gereja dalam konflik ini akan membahayakan Gereja di Indonesia.

324. Kementerian Luar Negeri Vatikan di bawah pimpinan Kardinal Agostino Casaroli (1979-1990) memiliki pandangan yang sama dengan pandangan banyak negara bahwa pengambilalihan oleh Indonesia bersifat menetap, baik secara internal maupun secara diplomatik, dan bahwa perlawanan yang terus berlanjut tidak ada gunanya dan bahkan berbahaya. Pat Walsh menginformasikan kepada Komisi bahwa pada 1980 Wakil Paus di Jakarta, Monsignor Pablo Puente, dan rekannya di PBB di New York, Monsignor Ettore de Filippo, memberitahu kepadanya bahwa pengambilalihan oleh Indonesia adalah *fait accompli*; bahwa pembangunan di masa Indonesia lebih baik daripada pembangunan di masa Portugal; bahwa Vatikan

.....
* Dalam laporan Mei 1980 ke Vatikan, para uskup Indonesia, yang juga mendapat tekanan dari pemerintah mereka, meminta “Takhta Suci mempertimbangkan dan memikirkan status Gereja Katolik di Timor-Leste sehingga Gereja Timor-Leste dapat sepenuhnya masuk dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia”. Mengutip Smythe, hal 59.

tanggung jawab melindungi kepentingan Gereja lokal, dan bahwa hal ini dapat tercapai melalui kerjasama dengan Indonesia.¹⁸⁵ Vatikan juga percaya bahwa usaha diplomasi diam-diam lebih produktif daripada diplomasi publik.* Hasil positif pendekatan ini dapat ditunjukkan dalam beberapa hal, contohnya, pengenalan Tetum sebagai bahasa katekis dan liturgi—suatu kontribusi yang signifikan bagi bertahannya kebudayaan—dan pemberian visa kepada para misionaris. Monsignor Puente juga percaya bahwa Indonesia telah menerima bahwa pendekatan militer yang menindas adalah salah, dan bahwa mereka mendengarkan usulannya mengenai peran substansial Gereja.

325. Monsignor Lopes memiliki sudut pandang yang sepenuhnya berbeda, yang secara efektif menyimpang dari strategi Vatikan dan serupa dengan pembangkangan. Setelah enam tahun yang sulit dan mengecewakan, ia tidak memiliki pandangan yang sama dengan keyakinan Vatikan pada militer dan integrasi. Pada Mei 1981, untuk pertama kalinya secara terbuka ia mengkritik tindakan kejam militer Indonesia. Kemudian, ketika ABRI menyalahkannya karena mereka merasa tidak didekati secara pribadi, Monsignor Lopes menanggapi dengan mengatakan bahwa pendekatan langsung yang telah dilakukan sebelumnya kepada pejabat militer senior, termasuk Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Yusuf, tidak menghasilkan perubahan apapun.† Ia juga mengkritik Gereja. Pada Juli 1981, ia turut menandatangani pernyataan yang menegur Gereja Indonesia dan Vatikan atas sikap diam mereka. Menunjuk pada kematian lebih daripada 200.000 orang selama enam tahun sebelumnya, pernyataan tersebut menyuarakan kepedihan:

Kami tidak mengerti mengapa Gereja Indonesia dan Gereja Romawi Universal hingga saat ini belum menyatakan secara terbuka dan resmi solidaritas mereka dengan Gereja, penduduk, dan agama di Timor-Leste. Mungkin ini adalah tamparan terkeras bagi kami... Kami terpana karena sikap diam ini, yang membiarkan kami mati ditinggalkan.¹⁸⁶

326. Ia tidak setuju bahwa rakyat Timor-Leste harus menyerah. Ia mengadvokasi pendekatan antikekerasan, tetapi membela hak pembelaan diri Fretilin dan bekerjasama dengan pemimpin Resistansi, Xanana Gusmão.‡

* Wakil Vatikan untuk PBB, Monsignor Renato Martino, memberitahu Patrick A Smythe: "Takhta Suci bertindak dengan cara sangat tenang, diam-diam... Tidak ada tiupan terompet, tidak ada keinginan publikasi". Op.cit. 191. Monsignor de Filippo berkata kepada Pat Walsh bahwa pada saat itu ia memiliki pandangan pasif tentang Timor-Leste di PBB.

† Rowena Lennox mengutip perkataan Administrator Apostolik tentang masa ini: "Berdasarkan ciri kenabian misi saya, saya merasakan keinginan kuat untuk memberitahu seluruh dunia... tentang genosida yang dilakukan di Timor, sehingga, saat kita mati, paling tidak dunia tahu kita mati berjuang." *Fighting Spirit of East Timor: The Life of Martinho da Costa Lopes*, Pluto Press, 2000, hal 174.

‡ Atas permintaan Xanana Gusmão ia menyelundupkan berkas-berkas ke luar Timor-Leste untuk Delegasi Eksternal Fretilin, yang membahayakan militer Indonesia, serta rekaman dan foto pembicaraan gencatan senjata pada 1983. Ia membicarakannya dalam sebuah seminar di Melbourne pada Oktober 1983: "Jose Gusmão Xanana berkata Fretilin adalah rakyat dan rakyat adalah Fretilin. Ini benar." *ACFOA East Timor Report*, No. 5.

327. Pada 1981, Vatikan menolak permintaan Monsignor Lopes untuk bertemu Sri Paus. Pada 1982, Vatikan menyalahkan Monsignor Lopes setelah ia menjadi pusat kontroversi mengenai masalah kelaparan di Timor-Leste setelah penyerangan militer pada 1981. Monsignor Puente mengkritik Administrator Apostolik dalam sebuah pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam. Whitlam yang pernah mengunjungi Timor-Leste tidak percaya bahwa Timor-Leste mengalami kekurangan pangan. Catatan Pemerintah Australia tentang pertemuan ini menyatakan bahwa: "Puente berbicara tentang Administrator secara hati-hati tetapi sangat penuh kritik. Whitlam berkata, ia beranggapan Administrator bertingkah laku 'keji'. Puente tidak mengungkapkan keberatan." Dalam perbincangan dengan pihak Keuskupan Australia, Menteri Luar Negeri Vatikan mengkritik Monsignor Lopes yang melebih-lebihkan situasi pangan dan, dalam kritik terselubung mengenai Administrator, meminta agar isu sulit dan peka tentang Timor-Leste ditanggapi dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan. Pada Maret 1983, Jenderal Benny Moerdani, seorang Katolik, ditunjuk menjadi kepala pasukan bersenjata Indonesia dan menekan Monsignor Puente untuk mengganti Monsignor Lopes. Hal ini terjadi pada April dan pada 17 Mei Monsignor Lopes terbang meninggalkan Dili bersama Wakil Paus.[†] Fretilin menolak seruan untuk menyerah yang dikeluarkan Jenderal Moerdani pada Agustus, dan serangan baru diluncurkan oleh militer Indonesia.

328. Rekan-rekan sesama pastor Monsignor Lopes marah atas perlakuan terhadap Monsignor Lopes. Dalam surat yang ditulis pada April kepada uskup-uskup Katolik sedunia, sekelompok pastor memuji Monsignor Lopes karena acap menjadi "satu-satunya suara yang muncul membela mereka yang dipaksa bisu dan takut, dan bagi mereka yang penegakan kebebasan berekspresi hanya akan mengakibatkan penahanan atau penghilangan". Pernyataan mereka mengungkapkan "kekecewaan" dan "luka yang dalam" pada "kampanye pencemaran nama baik" yang dilakukan untuk melawan Monsignor Lopes.¹⁸⁷

329. Dalam perjalanannya ke Portugal, Monsignor Lopes diterima oleh Paus Yohanes Paulus II di Roma, dan ia menggambarkan secara positif sikap Sri Paus. Ia juga bertemu dengan Kardinal Casaroli dan berkata kepadanya "pendapat Anda tentang Timor-Leste salah." Ia kemudian mengunjungi banyak negara di Eropa, Amerika Utara, dan Kepulauan Pasifik untuk menyuarakan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, serta, meskipun di beberapa tempat ia tidak diperhitungkan sebagai saksi yang dapat dipercaya, berkontribusi terhadap mobilisasi berbagai badan Gereja untuk mendukung Timor-Leste. Ia tidak kembali ke negara tempat kelahirannya dan meninggal di Portugal pada 1991.

* Submisi dan informasi tambahan dari Hon. E.G. Whitlam, Australian Senate Inquiry into East Timor, 1999, hal. 18 dan 97. Whitlam mempublikasikan secara luas kritiknya terhadap Monsignor Lopes, khususnya di Australia.

† José Ramos-Horta mengenang bahwa Monsignor Lopes mengatakan kalau pengunduran dirinya dilakukan karena tekanan politik tetapi menerima hal ini "sebagai rencana Tuhan" dan tidak pernah mengecam Paus atau Monsignor Puente. *Funu*, hal 203-4. Semua catatan menunjuk intervensi Jenderal Moerdani, meskipun jelas bahwa Vatikan telah kehilangan kepercayaan pada Administratornya.

Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB (1983-2003)

330. Penunjukan Dom Carlos Filipe Ximenes Belo oleh Vatikan dilakukan tanpa diadakan pembicaraan yang semestinya dengan para pastor setempat, dan awalnya ia tidak disukai pastor-pastor di Timor-Leste, khususnya dalam konteks pengunduran diri Monsignor Lopes. Monsignor Belo dengan hati-hati menolak berperan politik, yang merusak hubungannya dengan pihak Resistansi, tetapi seperti halnya dua pendahulunya, ia perlahan-lahan terpaksa menjadi lebih vokal. Ia menjelaskan gejala-gejala tersebut dalam surat kepada Wakil Paus di Jakarta:

Sejak 1983, tahun saya ditunjuk sebagai Administrator Apostolik, setiap tahun kami menyaksikan penganiayaan-penganiayaan serupa. Kami telah berbicara dengan pihak otoritas, tetapi tidak ada hasil. Rakyatlah yang selalu menderita.¹⁸⁸

331. Sejak awal masa jabatannya sebagai uskup, ia membaktikan dirinya kepada penentuan nasib sendiri baik sebagai hak maupun sebagai rumusan perdamaian abadi. Pada 5 Desember 1984, ia menulis surat kepada Komisi Katolik untuk Keadilan dan Perdamaian di Prancis:

Meskipun semua kekuatan melawan kami, kami tetap bersikukuh bahwa satu-satunya solusi konflik Timor-Leste adalah solusi politik dan diplomatik, dan konsep ini tetap kami sebarluaskan. Solusi tersebut harus mencakup, di atas segalanya, penghormatan hak rakyat atas penentuan nasib sendiri. Kami pun berharap bahwa imbauan Paus Yohanes Paulus II kepada Duta Besar Indonesia untuk Takhta Suci, yaitu [tentang] penghargaan atas identitas kultural, etnik, dan religius masyarakat Timor-Leste, diwujudkan. Selama hal ini tidak diterangkan, tidak akan ada solusi damai bagi Timor-Leste.¹⁸⁹

332. Sebagai tanda kepercayaan, Vatikan mengangkat Monsignor Belo sebagai Uskup pada 1988. Pada Februari 1989, uskup baru ini mengulangi dukungannya bagi penentuan nasib sendiri dalam sepucuk surat pribadi kepada Sekretaris Jenderal PBB, Javier Perez de Cuellar. Surat-surat serupa dikirimkan ke Presiden Portugal dan Sri Paus. Surat Uskup Belo tersebut menantang Sekretaris Jenderal untuk melangkah melampaui hubungannya dengan Portugal dan Indonesia serta meminta pendapat rakyat Timor-Leste secara langsung melalui referendum. Surat tersebut secara eksplisit menolak pernyataan yang dipertahankan Indonesia bahwa Timor-Leste telah sepenuhnya menjalankan hak penentuan nasib sendiri, dan menyiratkan bahwa pernyataan-pernyataan partai politik Timor-Leste tentang status Timor-Leste juga cacat. Uskup Belo menulis:

Rakyat Timor-Leste harus diizinkan memilih masa depan mereka melalui referendum. Hingga saat ini masyarakat Timor-Leste tidak diajak bicara. Pihak lain berbicara atas nama mereka. Indonesia menyatakan bahwa rakyat Timor-Leste telah memilih integrasi, tetapi

rakyat Timor-Leste sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Portugal menginginkan waktu untuk menyelesaikan persoalan. Dan kami terus mati sebagai manusia dan sebagai bangsa.

333. Menanggapi tekanan untuk menarik surat tersebut, Uskup menyatakan bahwa ia tidak mengadvokasi satu pilihan politik di atas pilihan politik lain, tetapi menegaskan prinsip demokratis. Wakil Paus, Monsignor Canalini, menjauhkan diri dari surat tersebut dengan menyatakan bahwa isi surat tersebut merupakan pandangan pribadi Uskup Belo semata.^{*} Pada 1987, ia menyatakan posisi resmi Vatikan dalam wawancara dengan salah satu media Indonesia, tetapi dinyatakannya bahwa kebijakan tersebut lebih merupakan uraian hukum ketimbang kenyataan. Pada 1990, dalam sebuah acara kebaktian di Dili, ia diminta menjelaskan posisi Vatikan tentang Timor-Leste, tapi ia menolak.

334. Sikap Uskup Belo sangat menegaskan hubungannya dengan pihak Resistansi dan menjadikannya peraih Penghargaan Nobel Perdamaian pada 1996. Anugerah bergengsi ini, yang diterimanya bersama-sama dengan José Ramos-Horta, membuat perhatian internasional terpusat pada pentingnya penentuan nasib sendiri, dan berperan dalam momentum yang mencapai puncaknya pada pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri ini pada Agustus 1999. Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Kepausan, Kardinal Roger Etchegaray, yang melakukan kunjungan yang disambut baik ke Timor-Leste pada Februari tahun itu, bergabung dengan Uskup Belo pada upacara pengantugrahan di Oslo.[†]

335. Vatikan tidak setuju kalau uskup-uskup lain mengeluarkan pendapat tentang Timor-Leste. Menanggapi surat Uskup Belo kepada PBB, Dom Manuel da Silva Martins, Uskup Setubal di Portugal, mengumpulkan tandatangan dari 160 uskup dalam surat dukungan yang dikirimkan kepada PBB. Kardinal Casaroli melarang Dom Manuel da Silva Martins mengirim surat tersebut, dan juga melarangnya berbicara secara terbuka tentang persoalan tersebut. Dom Manuel tidak sependapat, dan larangan dilonggarkan setelah pembantaian Santa Cruz pada 1991.[‡] Uskup Soma dari Jepang, yang mengumpulkan 1.257 tandatangan anggota Gereja untuk surat dukungan serupa yang dikirimkan kepada PBB, juga diperingatkan Vatikan. Suster Monica Nakamura memberitahu Komisi:

Suatu hari Uskup Soma memberitahu saya bahwa setelah ia menyatakan rasa solidaritasnya bagi Timor-Leste, ia menerima surat dari pejabat Vatikan yang bertanya kepadanya tentang siapa yang telah memberinya izin untuk melakukan hal semacam ini.

.....
^{*} *Readers Digest* melaporkan bahwa Wakil Paus memerintahkan Uskup Belo menjauh dari dunia politik. Paul Raffaele, "Hero of a Forgotten People", *Readers Digest*, Maret 1996. Edisi ini dilarang beredar di Jakarta.

[†] Uskup Belo mengomentari bahwa kunjungan Kardinal Etchegaray telah "mendorong kepercayaan terhadap Vatikan". *CIIR Timor Link*, Maret 1996.

[‡] Wakil Paus membuka semua referensi tentang Timor-Leste laporan-laporan *ad limina* lima tahunan hierarki Portugis atas dasar bahwa Dioses Dili bukan tanggungjawab Portugal lagi. Smythe op. cit. 91.

Dengan senyum lebar Uskup Soma berkata bahwa samasekali tidak perlu meminta izin untuk melakukan hal yang benar.¹⁹⁰

336. Di Australia, Uskup Hilton Deakin juga menolak berhenti mengeluarkan pernyataan terbuka.

Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Timor-Leste pada 1989

337. Banyak pihak berharap bahwa kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Timor-Leste pada 1989 akan menjelaskan ambiguitas dalam kebijakan Vatikan tentang wilayah ini dan menyatakan dengan tegas di mana Takhta Suci berpihak. Meskipun memahami pentingnya hal tersebut, ungkapan-ungkapan keprihatinan Sri Paus sebelumnya terbatas pada pengakuan tentang penderitaan di Timor-Leste, dukungan doa sepenuhnya, dan imbauan bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah lain untuk menghormati identitas rakyat Timor-Leste.^{*} Karena mengetahui peran Sri Paus dalam mewujudkan perubahan politik di Polandia, rakyat Timor-Leste berharap Sri Paus akan memanfaatkan kunjungannya untuk mendukung penentuan nasib sendiri secara politik, tetapi juga khawatir kalau-kalau kunjungan ini akan mendukung kedaulatan Indonesia. Kunjungan tersebut tidak menghasilkan kedua-duanya. Sri Paus mengakui konflik ini dan menyatakan prinsip-prinsip untuk penyelesaian konflik, tetapi menekankan ciri pastoral kunjungannya serta menyatakan bahwa solusi politik adalah masalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan masalah Vatikan.

338. Dalam wawancara di radio Portugis pada 1991, Paus mengenang kunjungan tersebut:

Saya pergi ke Timor-Leste bukan sebagai seorang politikus tetapi sebagai Paus dan uskup, sebagai pastor Gereja yang mengunjungi berbagai komunitas Katolik... hal yang saya inginkan bagi komunitas tersebut—yang juga saya katakan selama kunjungan saya di Timor—adalah bahwa komunitas tersebut harus dapat hidup sejalan dengan prinsip-prinsip, kebiasaan, tradisi, dan agamanya sendiri. Masalah politik adalah masalah yang harus diangkat di tempat lain: Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan saya harap—saya ungkapkan hal ini saat berada di sana, dan saya harus mengatakannya kembali kini—bahwa masalah Timor-Leste akan diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan serta hak-hak bangsa... Saya mempertahankan hubungan dengan uskup mereka, Monsignor Belo. Saya di sana juga memberikan perlindungan khusus bagi para korban... Namun satu hal yang harus ditekankan: apabila Anda berbicara tentang melupakan Timor-Leste, maka hal tersebut tidak berkaitan dengan perasaan saya yang sebenarnya, karena saya berdoa bagi pulau itu setiap hari.¹⁹¹

^{*} Contohnya, misa yang diadakan Paus Yohanes Paulus II di Fatima pada 1982 diterjemahkan ke dalam bahasa Tetum.

339. Rakyat Timor-Leste sangat menghargai kunjungan Sri Paus. Yang paling penting adalah dia datang. Alex Gusmão, salah satu pelajar yang berdemonstrasi di dekat Misa Kepausan di Tasitolu, menyampaikan kepada Komisi:

*Kami merasa sangat bangga. Apabila ia hanya mengunjungi Indonesia, berarti ia menerima Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia, tetapi ia mengunjungi kita. Hal ini memberi banyak harapan bagi kita.*¹⁹²

340. Masyarakat Timor-Leste membedakan Sri Paus dari birokrasi Vatikan yang tetap mereka kecam keras. Pemimpin Resistansi saat itu, Xanana Gusmão, yang menerima kunjungan Kepausan dengan tangan terbuka, pada 1991 menjawab pertanyaan tentang Vatikan:

Kami semua tahu tentang penyingkiran Monsignor Lopes dan penyingkiran para pastor Portugis, dan kami curiga suatu hari Monsignor Belo juga akan disingkirkan. Saya berpikir bahwa ini adalah tindakan tidak bermoral Vatikan, dan bahwa mereka bertindak berdasarkan kepentingan politik mereka sendiri. Pernyataan Pastor Tucci yang datang untuk mempersiapkan kunjungan Paus sangat mengejutkan. Ia berkata bahwa Vatikan tidak seharusnya mengorbankan kepentingannya hanya demi beberapa ratus ribu orang Katolik. Saya pikir ini bukan sikap yang benar. Kami terus merasakan pengaruh Jakarta pada Vatikan dan konsekuensi pengaruh yang dipaksakan Vatikan terhadap Gereja Timor-Leste.¹⁹³

341. Setelah kunjungannya, Paus Yohanes Paulus II memberikan lebih banyak penekanan pada kebutuhan akan adanya resolusi konflik yang damai dan benar. Untuk tetap sejalan dengan hal ini, misi Vatikan ke PBB menjadi lebih aktif dan melakukan protes terus-menerus untuk meminta hak-hak asasi manusia, dialog, dan pengurangan pasukan. Pada 1998, Sri Paus dan Menteri Luar Negeri, Kardinal Angelo Sardonio, membicarakan persoalan ini dengan Sekretaris Jenderal PBB dan memberikan dukungan mereka bagi proses PBB. Kekerasan yang terjadi setelah Jajak Pendapat pada Agustus 1999 memuakkan Sri Paus:

Kami tidak dapat menekan kepedihan kami yang sangat mendalam karena sekali lagi rasa kemanusiaan telah gagal ketika, menjelang kedatangan Milenium Ketiga, tangan-tangan pembunuh sesama saudara terangkat lagi untuk membunuh dan menghancurkan tanpa ampun... dalam usaha sia-sia untuk menghapus keinginan yang diungkapkan rakyat dan aspirasi sahnya...¹⁹⁴

Sikap Vatikan tentang Timor-Leste dan hubungan Vatikan dengan Indonesia

342. Vatikan tidak bertindak memobilisasi sumber-sumber globalnya untuk mendukung penentuan nasib sendiri secara politik yang dianggap Gereja setempat dan Administrator Apostoliknya sebagai kunci menuju perdamaian. Hal ini tidak dilakukan karena tiga pertimbangan yang berkaitan: konsep Vatikan tentang misi Gereja, perhatian bagi Gereja Katolik di Indonesia, dan *modus operandi* diplomatik Vatikan.

343. Misi Gereja ditegaskan pada Konsili Vatikan II (1962-65). Secara singkat, Konsili ini mengikat Gereja modern pada misi spiritual dan sosial di dunia, terbebas dari sistem politik apapun. Namun, Vatikan dan Gereja Timor-Leste berbeda dalam interpretasinya atas misi tersebut dalam konteks krisis di Timor-Leste. Gereja lokal, yang telah menjadi bagian dari sistem kolonial Portugis, kini menekankan basis komunitasnya, independen dari negara dan peran profetik.¹⁹⁵ Vatikan cenderung menggunakan pendekatan konsiliasi dan prinsip-prinsip yang ditekankan tanpa bersikap langsung atau spesifik. Vatikan juga beranggapan bahwa kebijakan dan pengelolaan isu Timor-Leste merupakan hak prerogatifnya, dan bukan tanggungjawab perwakilan setempat.

344. Tanggapan Vatikan juga dibentuk oleh tanggungjawabnya atas kesejahteraan dan misi Gereja di Indonesia, serta kepekaan terhadap situasi Gereja di Indonesia sebagai kelompok minoritas di negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Pada pertemuan pertama mereka pada 1985, Sri Paus berbicara kepada Uskup Belo:

Saya memahami posisi Anda. Saya berdoa bagi Timor. Saya menderita untuk Timor. Namun, di sisi lain, Gereja di Indonesia juga perlu perhatian kami.¹⁹⁵

345. Sejak Indonesia merdeka, hubungan Gereja - Negara di Indonesia secara umum baik. Sebagaimana yang terjadi di Timor-Leste, kemerdekaan didukung secara aktif oleh banyak pihak dalam Gereja Katolik, hal yang mengakibatkan berdirinya negara sekuler dan bukan negara Islam. Hubungan ini makin erat setelah Jenderal Soeharto mulai berkuasa pada 1965. Gereja, bekerjasama dengan pihak militer dan Soeharto, berperan dalam “mengimunitasi” masyarakat terhadap komunisme, dan bergabung dengan Orde Baru sebagai rekan dalam pembangunan bangsa melalui, di antaranya,

.....
* Dalam jumpa pers pada 1996, Uskup Belo berkata: “Saya sepenuhnya tahu norma-norma Gereja Katolik yang mengharuskan pemimpin agama tidak turut dalam praktik politik nyata yang menjadi bidang para politikus. Namun, sebagai uskup saya memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan suara orang-orang miskin dan sederhana yang, ketika diintimidasi atau diteror, tidak dapat melindungi dirinya sendiri atau menyuarakan penderitaan mereka.” 25 November 1996. Pastor Indonesia Romo Mangunwijaya mendukung usaha Uskup Belo dan berkata bahwa Pancasila, dasar negara Indonesia, juga mengharuskannya berbicara demi kepentingan publik.

jaringan institusi kesehatan dan pendidikannya yang disegani.^{*} Orang-orang Katolik memperoleh beberapa posisi berpengaruh dalam pemerintahan Soeharto yang bertujuan melindungi Gereja dari Islam militan. Seperti halnya Gereja Indonesia, Vatikan enggan membahayakan stabilitas hubungan ini dengan mengaitkan diri terlalu dekat atau secara terbuka dengan isu Timor-Leste.[†] Vatikan juga menghargai keuntungan hubungan harmonis dengan Indonesia bagi hubungannya dengan seluruh dunia Islam, sehingga lebih suka melihat masalah Timor-Leste sebagai isu politik dan bukan agama. Vatikan takut masalah Timor-Leste dipandang sebagai isu agama apabila Gereja yang lebih luas terlibat lebih jauh dalam persoalan ini. Gereja Indonesia bukannya tidak peka atas penderitaan Timor-Leste dan permintaan Gerejanya, tapi mengakui hambatan politik yang dialami dan memberi dukungan terbatas untuk memberikan bantuan serta pendampingan dalam bentuk praktik. Dalam suratnya kepada Monsignor Belo tertanggal 17 November 1983, yang ditulis setelah Uskup Belo menjelaskan persoalan Timor-Leste kepada para uskup dalam sidang mereka, Konferensi Wali-Gereja Indonesia menulis:

Gereja Katolik Indonesia... meskipun menghadapi banyak hambatan, telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengekspresikan solidaritas dan rasa persahabatan kepada umat dan seluruh rakyat Timor-Leste, yang sedang dibanjiri cobaan yang dahsyat baik secara fisik maupun spiritual.[‡]

346. Beberapa pastor Indonesia secara pribadi mendesak sikap yang lebih kuat yang, apabila diambil, mungkin akan memberikan lebih banyak pilihan bagi Vatikan.

347. Seperti yang telah disebutkan, Vatikan tidak melakukan diplomasi terbuka karena alasan kebijakan, atas dasar pemikiran bahwa konfrontasi membatasi opsi-opsi strategis, menutup pintu menuju dialog, dan tidak seproduktif protes pribadi. Sejalan dengan itu, pernyataan Vatikan tentang Timor-Leste bersifat umum ketimbang informatif; Vatikan tidak memublikasikan aktivitasnya atau mengecam militer Indonesia secara langsung, dan mencoba menahan siapapun yang melakukan hal tersebut. Kebijakan ini diberlakukan juga pada negara-negara lain yang berkaitan dengan Timor-Leste. Tidak ada bukti, contohnya, bahwa Vatikan menentang perdagangan senjata internasional dengan Indonesia, meskipun kebijakan Gereja menentang proliferasi senjata. Kebijakan untuk tidak menarik perhatian itu juga melindungi hubungan Vatikan dengan Indonesia. Berdasarkan penelitiannya, Pastor Patrick Smythe menyimpulkan:

.....
^{*} Peran Gereja Katolik pada masa pembersihan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terdokumentasikan dengan baik. Para uskup merasa cemas karena sejumlah pembunuhan dan meminta maaf karena tidak adanya tanggungjawab dari pihak mereka, yang mungkin berperan dalam pembunuhan yang kejam. Aktivistik Katolik Harry Tjan dan Jusuf Wanandi, yang menjadi penasihat Presiden Soeharto dalam pengambilalihan Timor-Leste, secara aktif turut dalam aktivitas antikomunis dan menjalin hubungan erat dengan militer.

[†] Serangan-serangan sektarian atas gereja-gereja Kristen terjadi setelah Soeharto jatuh.

[‡] Surat ini ditandatangani oleh Monsignor FX Hadisumarta, O.Cam dan Monsignor Leo Soekoto, SJ dengan mengatasnamakan Majelis Agung Wali-Gereja Indonesia (MAWI).

Secara umum Gereja memberikan ulasan terbatas tentang Timor-Leste dalam siaran radio atau publikasi cetaknya, dan dengan demikian gagal menjalankan tanggungjawabnya yang diproklamasikan “untuk melengkapi informasi yang masih kurang bagi mereka yang membutuhkannya, dan memberi suara bagi mereka yang bisu”.

348. Transparansi dan akuntabilitas bukanlah ciri khas diplomasi Vatikan mengenai isu Timor-Leste. Dengan ketiadaan beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur posisi resmi seperti perilaku pemberian suara, pengawasan oleh media, hibah, dan perdagangan, kurangnya informasi menyulitkan usaha untuk menilai tindakan yang menurut Vatikan diambil atas nama Timor-Leste, dan efektivitas tindakan-tindakan tersebut. Komisi berharap bahwa Vatikan akan membantu menyelesaikan persoalan ini, dengan membuat arsipnya terbuka bagi penelitian independen.

Kesimpulan

349. Vatikan berperan dalam usaha penentuan nasib sendiri di Timor-Leste dan Komisi mengakui nilai kontribusi ini, khususnya pada tahun-tahun ketika Timor-Leste hanya memiliki sedikit sekutu yang berpengaruh. Vatikan tidak menelantarkan Gereja di Timor-Leste.

350. Tapi, kontribusi Vatikan terbatas. Lebih banyak yang tidak dilakukan daripada yang dilakukan. Vatikan menjunjung tinggi prinsip penentuan nasib sendiri, dengan tidak memutuskan status Gereja lokal hingga rakyat Timor-Leste bebas memutuskan masa depan politik mereka sendiri, dan dengan tidak menyetujui dorongan integrasi baik dari Gereja maupun pemerintah di Indonesia. Pada 1989, Paus Yohanes Paulus II, dalam tindakan yang sangat dihargai, memasukkan Timor-Leste dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai tamu pemerintah Indonesia, tapi ia tidak menyetujui integrasi dengan Indonesia, seperti yang dikhawatirkan banyak orang Timor akan dilakukannya.

351. Di sisi lain, Vatikan tidak berupaya menyuarakan penentuan nasib sendiri atau mendesak pihak-pihak lain melakukan hal tersebut, dan bahkan kadang-kadang menyarankan integrasi. Hal ini dilakukan meskipun komunitas internasional secara prinsip setuju dengan pentingnya hak penentuan nasib sendiri dan sepakat bahwa hak ini telah disangkal keberadaannya di Timor-Leste, meskipun penentuan nasib sendiri merupakan aspirasi murni Gereja Timor-Leste dan satu-satunya cara yang mendasar dan nyata untuk menyelesaikan konflik serta mengatur masalah-masalah Gereja lokal. Pendekatan ini memungkinkan Vatikan menyeimbangkan tanggungjawabnya terhadap Gereja di Indonesia, tetapi melemahkan kemungkinan kontribusinya, khususnya selama tahun-tahun awal

.....
* Smythe, hal. 19. Ada banyak pengecualian lokal terhadap hal ini, terutama oleh lembaga perdamaian, keadilan, dan perkembangan Katolik di beberapa negara dan oleh beberapa tulisan keuskupan serta acara televisi.

ketika Vatikan secara khusus memperoleh informasi lengkap dan krisis berada pada titik terburuk. Ketika pihak-pihak lain bersuara, Vatikan berusaha membungkam mereka. Pembungkaman dilakukan kepada banyak orang di Gereja, contohnya kepada Dom Martinho da Costa Lopes, putra Timor asli pertama yang menjadi pemimpin Gereja di Timor-Leste, yang setia sepenuhnya pada Gereja, Sri Paus, dan rakyat Timor, dan yang komitmennya melekat pada cawan penderitaan dan doa, alih-alih pada partai politik. Vatikan telah mendiskreditkan Dom Martinho dan sebaiknya kini mengakui pelayanannya sebagai putra sejati Gereja dan wakil pihak-pihak lain di Gereja, khususnya para pastor dan suster di Timor-Leste yang mendampingi umat mereka pada masa-masa terkelam mereka, dan rekan-rekan Gereja di mana pun mereka berada.

Diplomasi Resistansi

352. Timor-Leste membentuk kampanye untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan pada tiga garis depan, yaitu: militer, diplomatik, dan klandestin. Bagian ini berhubungan dengan kampanye diplomatik dan mengemukakan kontribusi yang dilakukan oleh: 1) partai-partai politik, termasuk organisasi-organisasi payung Resistansi, dan 2) diaspora Timor-Leste. Usaha aktivis Timor di Indonesia dipaparkan di bagian lain dalam Laporan.

Partai-partai politik dan badan-badan payung

353. Dari lima partai bersejarah yang terbentuk di Timor-Leste setelah Revolusi Anyelir Portugal pada April 1974, hanya UDT dan Fretilin yang terlibat dalam kampanye internasional jangka panjang dengan tujuan menentukan nasib sendiri dan meraih kemerdekaan. Tiga partai kecil lainnya—Apodeti, KOTA, dan Tralbalhista—tidak memiliki kapasitas untuk berperan di luar negeri dan, kecuali Tralbalhista, mendukung integrasi dengan Indonesia.¹⁹⁶ Meskipun demikian, pada pertengahan Juli 1998, kelima partai ini bersatu menolak tawaran otonomi Habibie dan mengimbau diselenggarakannya referendum.¹⁹⁶

354. UDT merupakan partai pertama dan pada awalnya terbesar di Timor-Leste. Dalam sebuah pernyataan prinsip-prinsip yang disusun pada 1974, UDT melibatkan diri dalam “penentuan nasib sendiri rakyat Timor yang bertujuan membentuk federasi dengan Portugal, sebagai satu cara untuk meraih kemerdekaan”.¹⁹⁷ UDT mengembangkan kebijakan luar negeri, memercayakan João Carrascalão dengan portofolio hubungan luar negeri dan, dengan bantuan Partai Demokrat Kristen,

* *Partido Tralbalhista* (Partai Buruh Timor) mendukung kemerdekaan, tetapi Indonesia memanfaatkannya sebagai keuntungan propaganda, dan pemimpin-pemimpinnya tampak bekerjasama dengan Indonesia setelah pengambilalihan. Pat Walsh, *East Timor's Political Parties and Groupings*, Australian Council for Overseas Aid, April 2001, hal. 22.

mendirikan markas pusat (*Gabinete de Timor*) di Lisbon pada 1974. Meskipun UDT menerbitkan surat edaran dan terlibat dalam semacam kegiatan internasional, mereka tidak memulai membangun dukungan internasional untuk partainya atau untuk penentuan nasib sendiri secara sistematis.^{*}

355. Usaha UDT di Lisbon terlaksana berkat dedikasi beberapa individu, termasuk Moises do Amaral, Paulo Pires, dan, belakangan, Vicente Guterres. Seperti yang lainnya, partai itu juga memiliki beberapa penghubung dengan Timor-Leste. Tetapi pada tahun-tahun awal, ketika komunikasi sangat sulit, UDT memanfaatkan kontak rahasia yang dilakukan sesekali dengan simpatisan-simpatisan UDT yang berada di wilayah pendudukan, termasuk Mario Carrascalão, Uskup José Joaquim Ribeiro, dan Dom Martinho da Costa Lopes.¹⁹⁸ Di Portugal, di mana masyarakat sipil lebih terfokus pada Fretilin, partai tersebut tidak menarik dukungan signifikan dari masyarakat, tetapi orientasi pro-Portugalnya serta keberadaannya di Lisbon membantu tujuan Timor-Leste di tahun 1980-an, ketika Portugal meningkatkan perhatiannya pada masalah itu.

356. Kekalahan UDT dalam perang saudara dengan Fretilin pada 1975 menghancurkan partai tersebut secara politik dan organisasi. UDT tidak pernah membaik sepenuhnya, dan hal ini sangat melemahkan kontribusinya terhadap usaha penentuan nasib sendiri Timor-Leste. Perang itu mengakibatkan terpecahnya kepemimpinan serta anggota-anggota partai tersebut, dan marginalisasinya di Timor-Leste. Perselisihannya antara UDT dan Fretilin, yang pada awalnya berbagi cita-cita kemerdekaan dan berkoalisi, semakin mendalam dan berkembang.[†] Setelah invasi, perwakilan UDT mengambil posisi menyokong kemerdekaan, berlawanan secara internasional dengan pejabat-pejabat partai di Portugal; sementara rekan-rekan mereka di Timor-Leste mendukung integrasi dalam kesaksian kepada PBB dan Kongres Amerika Serikat. Hal ini merusak kredibilitas partai itu dan mengakibatkan timbulnya kekacauan dan ketidakpercayaan yang cukup besar secara internasional.[‡]

.....
^{*} Misalnya, James Dunn melaporkan bahwa UDT berhasil meraih minat yang besar di Australia pada 1974-1975 tetapi "Horta telah melakukan beberapa kunjungan ke Australia sebelum para pemimpin UDT mengaturnya". *East Timor: A Rough Passage to Independence*, Longueville Books, NSW, 2003, hal. 50.

[†] Domingos de Oliveira bersaksi kepada Komisi mengenai hubungan buruk dengan Fretilin yang telah timbul sebelum perang saudara dan diperburuk dengan adanya konflik dan akibatnya. Audiensi publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004. Menyusul invasi Indonesia, sejumlah anggota UDT dibunuh oleh anggota-anggota Fretilin di Aileu, Maubisse, dan Same. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa)

[‡] Mario Carrascalão, presiden komite pendiri UDT, membela integrasi dengan Indonesia atas nama UDT dalam debat pertama Dewan Keamanan PBB mengenai Timor-Leste setelah invasi Indonesia. Pada 1977, ia bersaksi kepada Kongres AS sebagai pemimpin UDT. Dalam kesaksian ini, ia mengkritik laporan James Dunn mengenai kekejaman Indonesia pada saat terjadinya invasi sebagai "kebohongan nyata", menuduh Australia "menyelundupkan senjata", menyangkal bahwa telah terjadi "serangan udara", mengatakan bahwa senjata-senjata yang beredar di Dili kebanyakan adalah "buatan Rusia", mengkritik Fretilin dan mengatakan bahwa Timor-Leste telah "mendapat banyak dari integrasi kami dengan Indonesia." ("Pernyataan Mario Carrascalao [sic.], pemimpin partai politik Uniao Democrática Timorese di Timor Timur", dalam *Human Rights in East Timor and the Question of the Use of U.S. Equipment by the Indonesian Armed*

357. UDT menjadi lebih aktif pada pertengahan 1980-an dan sejak 1993, setelah kembali pada garis demokrasi, merupakan pendukung Timor-Leste yang efektif. Namun, diplomasi Resistansi selama dekade pertama setelah invasi Indonesia sebagian besar justru dilakukan oleh Fretilin.

358. Pada awal keberadaannya, Fretilin membuat dua keputusan kebijakan bersejarah yang memberi dampak fundamental pada hasil kampanye internasional untuk kemerdekaan Timor-Leste, yaitu: ikut terlibat dalam diplomasi internasional dan memanfaatkan hukum internasional. Kedua keputusan tersebut lahir dari apresiasi realistis tentang kelemahan dan kerentanan Timor-Leste, dan berhasil karena pemanfaatan kekuatan negara lain demi kepentingan Timor-Leste.

Kebijakan internasionalisasi Fretilin

359. Sejak awal, Fretilin terlibat dalam lobi dan jaringan sistematis internasional. Sejak pertengahan 1974, perwakilan Fretilin yang bermarkas di Casa de Timor di Lisbon berusaha mencari dukungan para politikus, pemerintah, dan masyarakat umum Eropa. Utusan pemerintah Australia di Stockholm melaporkan adanya permintaan informasi dari beberapa pemerintah mengenai situasi Timor-Leste menyusul kunjungan-kunjungan Fretilin ke Eropa.¹⁹⁹ Francisco Xavier do Amaral, Nicolau Lobato, Mari Alkatiri, dan Roque Rodrigues menghadiri perayaan kemerdekaan Mozambik pada Juni 1975. Menyusul pernyataan dukungan terhadap Fretilin oleh konferensi 49 negara Afro-Asia di Mozambik pada September 1975, Mari Alkatiri mengunjungi beberapa negara Afrika dengan sukses pada November. Perwakilan Fretilin di Timor-Leste berfokus pada wilayah di sekitarnya. Alarico Fernandes mengunjungi Australia. José Ramos-Horta mengunjungi Indonesia, Selandia Baru, Fiji, dan Australia—kunjungan ke Australia pada saat itu lebih daripada satu kali. Sebagai imbalan, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan jurnalis mengunjungi Timor-Leste, terutama dari Australia tetapi juga dari Portugal.

360. Meskipun demikian, kebijakan luar negeri menjadi topik perdebatan kepemimpinan Fretilin pada 1975. Sebagian memandang bahwa diplomasi bergaya Barat tidak berguna, dan menyatakan bahwa Timor-Leste harus lebih berfokus pada kepercayaan diri dan perjuangan bersenjata. Sebagian lainnya mendukung pembentukan garis depan dengan gerakan-gerakan kemerdekaan lainnya di wilayah sekitar, termasuk gerakan pendukung di Indonesia. Walaupun demikian kebijakan resmi Fretilin tetap pro-ASEAN, dan menolak pendekatan dari Irian Jaya dan Maluku Selatan.²⁰⁰

Forces- Hearing before the Subcommittees on International Organizations and on Asian and Pacific Affairs of the Committee on International Relations, House of Representatives, 95th Congress, on Human Rights in East Timor and the Question of the Use of US Equipment by the Indonesian Armed Forces, 23 Maret 1977, US Government Printing Office, Washington, 1977, hal. 47-58.) Francisco Lopes da Cruz, Presiden UDT pertama, menandatangani Deklarasi Balibó dan Deklarasi 17 Desember 1975 yang membentuk Pemerintahan Daerah Indonesia di Timor Timur. Indonesia mengirim João Carrascalão ke Afrika dan Paolo Pires ke Belanda, tapi keduanya ditarik kembali ketika diketahui bahwa mereka menggunakan kesempatan itu untuk berbicara tentang situasi yang sebenarnya di Timor-Leste.

361. Menyusul Deklarasi Kemerdekaan pada November 1975, Fretilin memilih menginternasionalkan perjuangan kemerdekaan. Salah satu keputusan pertama Kabinet Republik Demokratik Timor-Leste yang baru dibentuk adalah membuka garis depan diplomasi dengan mengirim misi tingkat tinggi ke luar negeri. Delegasi ini terdiri atas Menteri Hubungan Politik, Mari Alkatiri; Menteri Pertahanan, Rogerio Lobato; dan Menteri Hubungan Luar Negeri dan Informasi, José Ramos-Horta. Riwayat diplomasi Timor-Leste mungkin akan sangat berbeda jika mereka tidak terburu-buru meninggalkan Timor sebelum kedatangan pasukan Indonesia.²⁰¹ Mereka bergabung dengan tiga perwakilan Fretilin lainnya yang telah berada di luar negeri, yaitu: Abilio Araújo, Menteri Ekonomi dan Sosial; Jose Luis Guterres; Guilhermina Araújo, Wakil Menteri Hubungan Ekonomi; dan Roque Rodrigues, Duta Besar untuk Mozambik. Tidak satu pun dari kelompok ini dapat kembali ke Timor-Leste, sehingga selama kurang lebih 24 tahun Indonesia berkali-kali menyatakan bahwa mereka tidak mewakili situasi Timor-Leste yang sebenarnya.

362. Meskipun tujuan utama mereka adalah memperkenalkan Fretilin dan Republik Demokratik Timor-Leste secara internasional, aktivitas mereka menjadi dasar kuat bagi kampanye penentuan nasib sendiri di masa depan. Merekalah yang membuka garis depan diplomasi utama di Eropa, Afrika, Amerika Serikat, dan di PBB. Hubungan yang kuat dan berkesinambungan juga dipelihara bersama organisasi-organisasi masyarakat madani di banyak negara. Jaringan ini merupakan aset yang sangat penting bagi suatu negara terbelakang dan miskin, yang hampir tidak memiliki sumberdaya sendiri dan hanya bersekutu dengan beberapa negara.

363. Delegasi Eksternal Fretilin mendirikan markasnya di Maputo, Mozambik, di bawah pimpinan Mari Alkatiri. Pemerintah Mozambik memberi dukungan kukuh selama konflik. Selain memberi basis operasional, dukungan ini juga berupa pendanaan, paspor, dukungan diplomatik di PBB, dan kesempatan belajar. Misi-misi Timor-Leste juga dibuka di Portugal (Abilio Araújo), Angola (Roque Rodrigues, setelah satu periode sebagai Duta Besar di Mozambik), dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (José Ramos-Horta). Tugas mereka mewakili Timor-Leste di luar negeri, dan mempromosikan perjuangan kemerdekaan, baik di negara asalnya maupun di negara-negara lain. Dukungan kuat dari negara-negara Afrika terhadap Timor-Leste di PBB merupakan hasil diplomasi yang berbasis di Mozambik ini. Anggota-anggota perempuan Fretilin yang berbasis di Mozambik juga aktif secara diplomatik dan mewakili Timor-Leste lebih jauh lagi, termasuk ke Timur Tengah.[†]

.....
* Sebagian besar pemimpin dan pelajar Fretilin yang bergabung dengan mereka yang dari Lisabon menyelesaikan kuliahnya di Mozambik dalam bidang studi seperti pertanian, hukum, dan hubungan internasional. Sebagian besar dari mereka kembali ke Timor-Leste setelah 1999, dan memanfaatkan pengetahuan mereka untuk melayani negara baru tersebut. Wawancara CAVR dengan Harold Moucho, 19 Maret 2005. Tabungan bank resmi Fretilin pada waktu itu adalah di Mozambik.

† Anggota-anggota perempuan Fretilin di Mozambik termasuk Ana Pessoa, Filomena de Almeida, Adelina Tilman, Marina Ribeiro, dan Madalena Boavida. Adelina Tilman adalah bagian dari tim Fretilin di PBB.

364. Karena pengaruh Indonesia, kehadiran Fretilin tidak diterima di sebagian besar wilayah Asia-Pasifik, sehingga mulai April 1976 Pemerintah Australia melarang kunjungan pejabat-pejabat Fretilin ke Australia.⁷ Hanya sedikit pemerintah sosialis di Asia Timur yang mengakui eksistensi Republik Demokratik Timor-Leste. Pada awalnya, Republik Rakyat Cina memberi dukungan diplomatik dan finansial kepada Fretilin.⁸ Kunjungan-kunjungan dilakukan ke Republik Demokrasi Kamboja, sedangkan kontak persaudaraan dengan Republik Demokrasi Korea dan Republik Demokrasi Laos tetap dipertahankan.⁹ Republik Vanuatu, setelah merdeka pada 1980, merupakan suatu pengecualian di Pasifik Selatan, di mana pemimpinnya, Walter Lini dan Barak Sope, mendukung Timor-Leste di PBB dan menyetujui pembentukan usaha ekonomi oleh Abilio Araújo di Vanuatu untuk membiayai kegiatan-kegiatan diplomatik Fretilin.⁵

365. Penolakan akses ke Australia terhadap pejabat-pejabat Fretilin diatasi dengan kehadiran kader-kader Fretilin dan kelompok-kelompok solidaritas yang mewakili Fretilin secara *de facto* di negara itu. Kegiatan-kegiatan mereka, di antaranya, mengoperasikan penghubung radio yang berbasis di Darwin, yang, hingga penutupannya pada 1978, merupakan satu-satunya jalur komunikasi langsung dua-arah antara Resistansi Fretilin di Timor-Leste dengan garis depan diplomatik. Meskipun demikian, anggota-anggota Fretilin di Australia bersikap lamban untuk berperan secara terbuka. Mereka merupakan minoritas di tengah komunitas yang sebagian besar penganut UDT dan, sebagai pengungsi, mereka takut akan diusir jika mereka berpihak secara terang-terangan pada Fretilin menentang Indonesia. Demonstrasi pertama saat bendera Fretilin dan RDTL dikibarkan secara terang-terangan diadakan di Sydney pada 1981. Situasi politik Australia menenang setelah pemilihan Pemerintahan Buruh Hawke pada 1983. Banyak orang Timor, termasuk pengurus-pengurus Fretilin seperti Lay Kuon Nhen, Abel Guterres, dan yang lainnya, turut ambil bagian dalam *rally* publik di Melbourne, yang diamanatkan oleh Abilio Araújo dan Roque Rodrigues, dan mereka juga menghadiri demonstrasi pada konferensi Partai Buruh di Canberra pada tahun yang sama. Komite Fretilin resmi yang pertama dibentuk di Sydney pada 1986, dengan Harold Moucho sebagai koordinator. Sampai pada akhir 1980-an, Fretilin telah berdiri mapan di beberapa bagian di Australia,

* Perdana Menteri Australia, Malcolm Fraser, memberitahu Presiden Soeharto pada November 1975 bahwa Pemerintahnya tidak akan menerima Ramos-Horta atau perwakilan Fretilin lainnya jika mereka datang ke Australia. (Dokumen 344, Jakarta, 25 November 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 580-581.) Pelarangan itu ditarik pada 1993 oleh Pemerintah Buruh Hawke.

† Cina mengakui Republik Demokratik Timor-Leste dan menegaskan dalam pembelaannya di Dewan Keamanan. Mari Alkatiri dan José Ramos-Horta mengunjungi Cina pada awal terjadinya konflik. Mari Alkatiri, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003.,

‡ Rogério Lobato, Panglima Pasukan Revolusioner Timor-Leste, kepada Ieng Sary, Wakil Perdana Menteri Luar Negeri Republik Demokrasi Kamboja, 21 Desember 1977.

§ Perwakilan Vanuatu di PBB, Robert van Lierop, secara aktif mendukung Timor-Leste di sejumlah forum. Usaha ekonomi itu gagal tetapi merupakan bukti upaya dan kreativitas yang dibutuhkan untuk memenuhi anggaran kampanye internasional.

termasuk Darwin, Sydney, Melbourne, dan Perth, dan mempunyai jaringan komunikasi yang baik dengan gerakan perlawanan di Timor-Leste. Agio Pereira adalah wakil Fretilin pertama di Australia. Yang lainnya adalah Alfredo Ferreira Borges, Estanislau da Silva, dan Francisco Carlos. Mereka tanggung jawab atas berbagai bagian Australia dan di wilayah itu, serta bekerja keras membangun relasi dengan partai-partai politik, Gereja, masyarakat madani, dan media guna memperoleh dukungan bagi Timor-Leste. Pada 14-20 Agustus 1998, Fretilin mengadakan Konferensi Luarbiasa di Sydney.

Pemanfaatan hukum internasional

366. Kampanye awal Fretilin berdasarkan Deklarasi Kemerdekaan Unilateral (UDI) pada 28 November 1975, dan pembentukan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Ketika mereka tiba di PBB di New York pada 11 Desember 1975, Abilio Araújo dan José Ramos-Horta memperkenalkan diri sebagai menteri RDTL. Dalam pidatonya kepada Dewan Keamanan pada 15 Desember, José Ramos-Horta mengadukan UDT, menyatakan UDI 28 November sebagai “sebuah tindakan heroik untuk menentukan nasib sendiri”, dan meminta Dewan mengutuk invasi Indonesia sebagai tindakan agresi terhadap negara berdaulat yang diakui oleh “negara lain dalam jumlah yang semakin besar.”²⁰² Pada 12 April 1976, dia memberitahu Dewan Keamanan bahwa Fretilin “tidak lagi mengakui kedaulatan Portugis atas Timor-Leste”, dan dengan demikian menolak pendapat PBB bahwa Portugal tetap menjadi kuasa pemerintahan di Timor-Leste. RDTL, dikatakannya, siap menghadapi Indonesia dan Portugal hanya dalam hubungan “antara pemerintah dan pemerintah, atau negara dan negara.”²⁰³

367. Walaupun demikian, tidak lama kemudian menjadi jelas bahwa, dalam kata-kata José Ramos-Horta, “pengakuan terhadap Republik Demokratik Timor-Leste tidak akan terwujud”, karena hanya segelintir negara yang siap mendukung negara baru tersebut. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi:

Tentunya dalam beberapa minggu pertama setelah invasi, saya dan yang lainnya berargumen dengan penuh semangat mengenai Republik Demokratik Timor-Leste. Tetapi sekitar 1976-1977, kami memutuskan untuk mengubah sikap dan berkonsentrasi pada Timor-Leste sebagai wilayah tak berpemerintahan sendiri dengan hak atas penentuan nasib sendiri... Kami akan berada dalam posisi hukum yang lebih kuat dengan dasar penentuan nasib sendiri bagi sebuah wilayah yang tak berpemerintahan sendiri.

368. Pada saat itu, seorang rekan yang tidak senang dengan keputusan tersebut menyarankan agar mereka mempertahankan jabatan kementerianya supaya ketika pemerintah negara-negara menyambut mereka, berarti mereka mengakui RDTL. Ramos-Horta menjawab: “Satu-satunya masalah dengan permintaan itu adalah kita mungkin tidak akan pernah mendapat undangan untuk pergi ke

manapun!”[†] Walaupun tidak ditarik secara resmi, kebijakan 1975 secara diam-diam dikesampingkan.[†]

369. Keputusan Fretilin untuk lebih memanfaatkan sistem diplomasi internasional daripada perang berdasar pada penilaian pragmatik terhadap realitas politik. Kemunduran strategis ini tidak langsung membuahkan hasil politik dan tetap memerlukan waktu untuk diterjemahkan ke dalam hal-hal yang praktis, tetapi menguntungkan Timor-Leste dalam jangka panjang. Penentuan nasib sendiri memfokuskan perhatian pada prinsip-prinsip dasar yang dipertaruhkan, ketimbang pada tuntutan kelompok yang berkepentingan. Hal ini meningkatkan legitimasi serta daya tarik terhadap isu ini, serta menajamkan fokus pada tanggungjawab komunitas internasional, Portugal, dan terutama PBB. Dalam beberapa waktu, terbentuk hubungan yang luas dengan Portugal, orang Timor yang bukan anggota Fretilin, Gereja, dan masyarakat madani. Selanjutnya perjuangan dijadikan sebagai isu moral dan hak asasi manusia untuk menentang Indonesia dan sekutu utamanya, terutama negara-negara demokratis Barat yang menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia.

Upaya diplomasi di PBB

370. Sebagai badan dunia yang tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak-hak atas penentuan nasib sendiri, PBB merupakan arena utama dalam penyelenggaraan usaha diplomasi Resistansi. Usaha ini dibebankan terutama pada Fretilin karena UDT dan aktivis-aktivis independen Timor tidak melibatkan diri hingga pertengahan 1980-an. Fretilin memercayakan tugas ini kepada José Ramos-Horta sebagai wakilnya di New York selama 13 tahun, hingga pengunduran dirinya dari keanggotaan pada 1998.

371. Pekerjaan itu membutuhkan banyak usaha, keahlian, kreativitas, dan daya tahan yang sangat tinggi. “Orang-orang Indonesia,” ungkap José Ramos-Horta kepada Komisi, “sangat menguasai keadaan setiap saat.”²⁰⁴ Adalah sangat penting memahami cara kerja PBB itu sendiri dan, melalui studi dan diskusi, mencapai suatu tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai hubungan internasional serta politik negara-negara anggota yang berpengaruh. Dari hari ke hari, usaha tersebut mencakup lobi terus-menerus, bersikap waspada, memonitor informasi, serta membangun dan memelihara hubungan dengan sejumlah besar negara, pejabat, jurnalis, dan masyarakat madani. Usaha itu lebih intensif pada titik-titik tertentu dalam kalender PBB, terutama ketika hal-hal yang dipertaruhkan bagi Timor-Leste memuncak. Anggota lain dari Delegasi Eksternal bergabung dengan

* Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, 26 Mei 2004. Kira-kira 20 negara, yang sebagian besar di Afrika, mengakui RDTL.

† Dalam keputusannya, Pengadilan Permanen Rakyat (*Permanent People's Tribunal*) yang disponsori oleh Fretilin dan diadakan di Lisabon pada 19 - 21 Juni 1981, mengakui legitimasi dan keabsahan pembentukan Republik Demokratik Timor-Leste. (*Sessão Sobre Timor-Leste*, Lisabon, 19/21 Junho 1981, *Sentença*, hal. 29-30.) Meskipun demikian, penyebutan RDTL tidaklah menolong secara hukum. Pada 1980, kasus Fretilin melawan pemerintah Belanda mengenai penjualan *corvette* ke Indonesia ditolak oleh pengadilan dengan alasan bahwa RDTL ataupun Fretilin tidak memiliki status yang sah. Krieger, hal. 298.

José Ramos-Horta dalam kesempatan ini. Untuk memastikan komplementaritas dan konsistensi, usaha ini tetap harus dikoordinasikan dengan kegiatan diplomasi Resistansi di negara-negara tertentu, yang juga membutuhkan keahlian serupa tetapi dalam skala yang lebih kecil dan lebih ringan.

372. Selain skala tugas politik yang monumental itu, José Ramos-Horta dan rekan-rekan Fretilinnya harus juga menghadapi banyak tantangan praktis dan organisasi. Delegasi itu mengalami kekurangan sumberdaya manusia dan finansial. Pada awalnya, misi Guinea-Bissau menyediakan tempat untuk perwakilan Fretilin di kantornya, sedangkan dukungan staf, yang tidak pernah cukup, disediakan oleh para sukarelawan.⁷ Komunikasi dengan Timor-Leste bersifat tidak langsung dan tidak berkala. Sebagai gerakan kemerdekaan, delegasi itu tidak diakui statusnya sebagai suatu pemerintahan ataupun pengamat.⁸ Karena itu, perwakilan Fretilin tidak mampu “memperdagangkan” suara, hibah, atau bahan dagangan sebagai imbalan atas dukungan. Semua bergantung pada niat baik beberapa negara yang bersahabat, terutama Mozambik, Guinea-Bissau, dan negara-negara bekas jajahan Portugis di Afrika lainnya, yang juga baru merdeka. Dukungan ini dilengkapi pada awalnya dengan adanya dukungan dari Duta Besar Tanzania untuk PBB dan Ketua Komite Khusus Dekolonisasi, Salim A. Salim, serta wakil Republik Rakyat Cina, Huang Hua.

373. Portugal bersikap mendukung dalam perdebatan PBB tetapi tidak secara aktif. Sebaliknya, Indonesia telah memiliki kekuatan karena memiliki kedutaan besar di negara-negara penting dan, tanpa perlu mempertimbangkan pola pemilihan suara di PBB, memiliki pula dukungan diplomatik dari sebagian besar negara-negara Barat, Muslim, dan Asia, ditambah dengan bantuan ekonomi dan militer dari Barat yang signifikan. James Dunn berkomentar: “Di dalam PBB, perjuangan ini ibarat perjuangan antara Daud dari Timor melawan Goliath dari Indonesia.”⁹ Koordinasi dengan diplomat Fretilin lainnya sulit dan membutuhkan banyak biaya. Di samping itu, delegasi dirintangi oleh perbedaan ideologi internal dan persepsi yang merusak (yang terkadang dikonfirmasi oleh pernyataan

.....
* David Scott membantu membuat misi itu dengan bantuan dari Pusat Perempuan Metodis (Methodist Women Centre) di PBB. Sebagai salah satu dari orang Australia yang terakhir meninggalkan Timor-Leste pada malam sebelum terjadinya invasi Indonesia, dia hampir berangkat langsung ke New York atas nama Asosiasi Timor-Leste Australia untuk membantu Fretilin melobi Dewan Keamanan. Kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.

† Tidak seperi organisasi-organisasi Palestina dan Afrika Selatan, ANC dan PAC, Fretilin tidak diberi status pengamat di PBB. Walaupun demikian, namanya diakui dalam preambuli resolusi Majelis Umum antara 1976 dan 1982. Dalam Resolusi 36/50 1981, Fretilin disebut sebagai “gerakan pembebasan Timor-Leste”. Krieger hal. 27.

‡ José Ramos-Horta, *Prakata dalam Towards a Peaceful Solution in East Timor*, East Timor Relief Association (ETRA), NSW, Australia, 1996, hal. 7. Cerita dalam Alkitab mengenai Daud dan Goliath (1 Samuel, 17:1-58) adalah perumpamaan yang tepat untuk Timor-Leste. Daud mempelajari keberanian dan ilmu berperangnya sebagai seorang anak gembala yang melindungi sekumpulan hewan miliknya dari hewan liar, termasuk dari singa dan beruang. Dalam waktu senggangnya, dia mengembangkan dua keahlian lain—musik dan puisi. Dia menghadapi Goliath, si Raksasa Filistin, seorang diri dan mengalahkan kekuatan superior Goliath dengan katapel.

sendiri dan aliansinya), yang menganggap bahwa dalam Perang Dingin, Fretilin telah ambil bagian menentang negara-negara Barat.^{*} Selain itu Fretilin harus menghadapi upaya sistematis Indonesia dan orang-orang Timor yang bersaksi kepada PBB mendukung integrasi guna menggerogoti kredibilitasnya. Kepada Dewan Keamanan, pihak-pihak tersebut mengatakan bahwa Fretilin tidak mewakili mayoritas pendapat di Timor-Leste, dan beralasan bahwa dari lima partai yang ada di Timor, hanya Fretilin yang menentang integrasi, serta bahwa Fretilin telah terlibat dalam kegiatan terorisme di Timor-Leste.[†]

374. Pada awalnya mayoritas suara dalam Dewan Keamanan dan Sidang Umum berpihak pada Timor-Leste dan menjunjung tinggi hak atas penentuan nasib sendiri. Namun, jumlah pendukung itu tidak mencerminkan realitas kekuatan politik dan ekonomis Indonesia, ataupun meningkatnya keyakinan bahwa pendudukan Indonesia di Timor-Leste tidak dapat diubah. Walaupun Fretilin telah berusaha, naskah resolusi melemah antara 1975 dan 1981, dan jumlah negara yang menolak ataupun abstain dalam sidang PBB bertambah. Pada 1981, negara yang mendukung Timor-Leste sebanyak 54 negara, 42 negara menolak, dan 46 negara lain abstain. Ini berarti secara global hanya 34% negara yang mendukung kasus Timor-Leste.

375. Strategi yang berbeda-beda telah dicoba, dengan tingkat kesuksesan yang bermacam-macam. Fretilin berhasil mengirim misi pencari-fakta PBB ke Timor-Leste pada 1976, tetapi Indonesia memblokir utusan PBB, Vittorio Winspeare Guicciardi, untuk menemui para pemimpin Resistansi Fretilin, dan kunjungan itupun tidak membuahkan hasil. Sekretaris Jenderal PBB, Kurt Waldheim, tidak menuntaskan hal ini, dan kasus Timor-Leste tidak dimasukkan kembali dalam agenda Dewan Keamanan sampai 1999. Untuk memperpanjang waktu dan memperkuat posisi legal Timor-Leste, José Ramos-Horta mengusulkan membujuk Sidang Umum untuk meminta *advisory opinion* dari Mahkamah Internasional mengenai pernah atau tidak pernahnya dilakukan tindakan penentuan nasib sendiri yang pantas, seperti yang dikatakan oleh Indonesia. Walaupun demikian, Portugal tidak setuju dan ide itu pun tidak dikembangkan.[‡] Dengan bantuan Francesc

.....
^{*} David Scott menulis: "Abilio Araújo melihat perjuangan dalam konteks Marxis-Leninis yang dia dapatkan di Lisabon. Ia dan José Ramos-Horta berdiskusi dan berdebat di Portugal mengenai pendekatan-pendekatan dan terminologi kebijakan. Abilio ingin kami menggunakan bahasa Marxis dalam membuat pernyataan kepada media; José memilih untuk menggunakan pendekatan politik yang lebih netral dan terfokus secara nyata." Naskah yang tidak diterbitkan, 2004.

[†] Pernyataan pertama Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB mengenai Timor-Leste, dikirim oleh Anwar Sani, pada 15 Desember 1975, mencakup tuduhan terorisme terhadap Fretilin. (Krieger, hal. 60.) Orang-orang Timor yang bersaksi atas nama Indonesia dalam sesi Dewan Keamanan ini adalah Mário Carrascalão (UDT), José Goncalves (Independenti), dan José Martins (KOTA). Pernyataan mereka, yang mencakup serangan terhadap Fretilin dan José Ramos-Horta, berakibat buruk terhadap kredibilitas dan advokasi Fretilin dalam PBB, serta memperkuat persepsi internasional bahwa masyarakat Timor-Leste sangat terpecah-pecah dan tidak stabil. (Krieger, hal. 70-77) José Martins "hengkang" secara formal pada Maret 1976 dan menyerahkan sebuah laporan rahasia kepada PBB yang berisi perincian rencana Indonesia terhadap Timor-Leste.

[‡] Portugal percaya bahwa Timor-Leste belum menggunakan hak-haknya dan bahwa Timor-Leste seharusnya tidak mempertanyakan keyakinan ini dengan meminta pendapat kepada Mahkamah Internasional. Dalam aksi terpisah pada 1991, Portugal membawa Australia ke Mahkamah Internasional, antara

Vendrell di Sekretariat PBB, José Ramos-Horta berhasil membuat Sidang Umum menyinggung situasi kemanusiaan di Timor-Leste dalam resolusi-resolusi yang diadopsi pada 1979-1981. Resolusi tersebut mencakup tuntutan akses oleh UNICEF, UNHCR, dan WFP untuk memberi bantuan dan, secara tidak langsung, berhasil memperingatkan komunitas internasional mengenai dampak negatif pendudukan Indonesia dan menentang pelarangan akses Indonesia. Namun, Indonesia hanya memberi akses kepada UNICEF.²⁰⁵

376. Salah satu cara mengukur kesuksesan diplomasi Resistansi di dalam negeri dan di PBB adalah dengan menghitung referensi terhadap Timor-Leste yang dibuat dalam debat PBB. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi bahwa ia menghadiri sejumlah besar sesi Sidang Umum PBB hanya dengan harapan akan mendengar isu Timor-Leste disebut, terutama oleh tokoh-tokoh senior pemerintah. Tetapi yang sering ia dapat hanya kekecewaan.

*Kita hitung apa yang kita dengar di Sidang Umum. Ketika seorang kepala negara, perdana menteri, atau menteri luar negeri membawa sebuah isu kepada sidang pleno Sidang Umum, itu merupakan sesuatu yang signifikan. Setiap tahun saya duduk di situ, mendengar, menghitung, dan setiap kali saya dengar satu acuan kecil saja, saya akan terkesima: 'Wow, ini dia!' Tapi ini tidak banyak terjadi.*²⁰⁵

377. Ketika itu, Delegasi Eksternal Fretilin mengalami masalah internal ideologi dan kepemimpinan yang berat, bersamaan dengan “pembersihan” internal Fretilin di Timor-Leste yang diperburuk oleh pemerosotan kegiatan militer, termasuk kematian pemimpin Fretilin, Nicolau Lobato, dan situasi diplomatik Timor-Leste yang rumit. Semua masalah itu memuncak pada 1978 di Maputo, ketika Mari Alkatiri, Marina Ribeiro, José Ramos-Horta, dan Ana Pessoa dijadikan tahanan rumah oleh rekan-rekan Fretilin. Ramos-Horta dikenai tuduhan “kapitulasionalisme,” dan ia menilai peristiwa tersebut sebagai “buruk dan sadis.”²⁰⁶ Ia mengatakan kepada Komisi:

*Saya dituduh mau bernegosiasi dengan Indonesia hanya karena saya tidak setuju dengan slogan di Timor waktu itu...dari Komite Sentral, yakni “Negosiasi, Takkan Pernah”.*²⁰⁷

378. Ia berpendapat bahwa fleksibilitas untuk berdialog, termasuk dengan Indonesia, seharusnya tidak disamakan dengan menyerah dan merupakan hal yang signifikan

lain atas pelanggaran terhadap hak atas penentuan nasib sendiri Timor-Leste dengan ditandatangani perjanjian Australia dengan Indonesia untuk bersama-sama mengeksploitasi sumber minyak dan gas di Laut Timor.

* Pada Juni 1982, UNICEF dan Palang Merah Indonesia memulai program untuk anak-anak, ibu-ibu, dan keluarga mereka. Sebagai bagian dari program, UNICEF mengajarkan bahasa Indonesia kepada perempuan-perempuan Timor dengan alasan bahwa mereka harus mengetahui bahasa Indonesia untuk dapat memahami cara memberi makan dan informasi kesehatan lainnya. Penggunaan bahasa Indonesia menimbulkan kritik kuat dari José Ramos-Horta. (Wawancara CAVR, 26 Mei 2004.) UNHCR memberi kontribusi dengan mendanai beberapa repatriasi ke Portugal dan Cape Verde.

untuk mengakhiri konflik. Ia mengatakan pula bahwa Abilio Araújo mendalangi peristiwa itu, dengan dukungan dari Rogério Lobato dan aktivis Australia Denis Freney, yang juga hadir dalam pertemuan-pertemuan.^{*} Isu tersebut diselesaikan dengan bantuan dari wakil-wakil Frelimo.

379. Peristiwa itu merusak Fretilin secara internal dan menghambat kampanye internasionalnya, walaupun hal ini tidak diumumkan secara luas. Karena kesibukannya di Mozambik dari September 1978 sampai Februari 1979, José Ramos-Horta terpaksa membatalkan kunjungannya ke Selandia Baru, yang telah berhasil diatur oleh kelompok-kelompok solidaritas setelah secara terbuka bertentangan dengan pemerintah mereka, serta tidak dapat mewakili Timor-Leste pada Sidang Umum PBB tahun itu. Delapan negara menarik dukungan terhadap Timor-Leste selama sesi itu. Kecenderungan kemunduran tersebut sedikit berbalik pada tahun berikutnya. Berkat kerja keras delegasi Fretilin, Timor-Leste berhasil meraih kembali tiga suara.

Voting 1982 di PBB

380. Sesi Sidang Umum PBB 1982 menjadi ajang uji kekuatan bagi para pemain utama dan merupakan detik-detik kritis bagi Timor-Leste. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Pinto Balsemão, Portugal menunjukkan niat untuk membahas kembali isu tersebut, menyusul pernyataan dari Dewan Kementerian pada 1980 yang menyetujui penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste dan adanya inisiatif diplomatik. Sementara itu, Indonesia memperoleh, antara lain, dukungan lebih jauh dari Australia. Beberapa hari sebelum di Sidang Umum, mantan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, mengatakan kepada Komite Khusus Dekolonisasi PBB:

*Ini adalah saat yang tepat untuk mencoret persoalan Timor-Leste dari agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan berhenti menyibukkan serta mengusik bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan Pasifik.*²⁰⁸

381. Sebagai tanggapan, José Ramos-Horta mengusulkan agar isu tersebut ditujukan pada 'jasa baik' Sekretaris Jenderal PBB, yang saat itu dijabat oleh Javier Perez de Cuellar (1982 - 1991). Di apartemen bawahan yang sederhana di suatu bilangan East 55th Street, New York, ia menyusun rancangan resolusi sederhana, dengan harapan bahwa negara-negara anggota akan menerima rancangan tersebut. Ia yakin bahwa rancangan resolusi tersebut merupakan "kontribusi paling berharga" yang ia berikan pada perjuangan Timor-Leste.[†]

^{*} José Ramos-Horta mengucapkan terima kasih atas kontribusi Denis Freney kepada Timor-Leste dalam Pidato Penerimaan Hadiah Nobel Perdamaian di Oslo pada 10 Desember 1996. Meskipun demikian, ia mengkritik sikap "destruktif" Denis Freney pada saat itu, dan menyebutnya "sangat berdedikasi pada Timor-Leste tetapi melalui kepercayaan ideologinya sendiri, dan Abilio adalah teman dalam perjuangan yang ideologinya benar-benar tepercaya". Wawancara CAVR, 26 Mei 2004.

[†] Resolusi Sidang Umum 37/30, 23 November 1982. Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 29 Juli 2004.

382. Indonesia berusaha keras menentang. Tapi, dengan dukungan dari Roque Rodrigues, José Luis Guterres, dan sekutu utama Timor-Leste—Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambik, São Tomé dan Príncipe, Portugal, Brasil, Vanuatu, Zimbabwe, Benin, dan Aljazair—resolusi tersebut lolos, meskipun hanya dengan mayoritas empat suara. Ramos-Horta mengaku kepada Komisi bahwa “masalah Timor tidak akan pernah membaik jika kalah dalam resolusi itu”.²⁰⁹ Lebih daripada setengah jumlah suara untuk Timor-Leste didapat dari negara-negara Afrika tempat markas delegasi Fretilin berada.*

383. Secara operasional, resolusi itu merupakan pertarungan, karena masa depan Timor-Leste dipercayakan penuh kepada dua pihak yang oleh Fretilin masih diragukan komitmennya, yaitu: Pemerintah Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB.† Referensi dalam rancangan Ramos-Horta untuk berkonsultasi dengan Fretilin dan orang Timor lainnya, diganti dalam naskah akhir dengan referensi yang tidak jelas untuk [berkonsultasi dengan] “semua pihak yang bersangkutan secara langsung”, yang memercayakan kepada Sekretaris Jenderal, Javier Perez de Cuellar, untuk memutuskan dengan siapa ia harus berkonsultasi, dan kepada Portugal untuk memastikan bahwa pandangan pihak Timor didengar juga dalam proses itu.

384. Tanda-tanda pertama itu tidak memberi alasan untuk bersikap optimistis. Hampir 12 bulan setelah isu tersebut ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, José Ramos-Horta secara publik menuduh Portugal telah bersikap tak acuh, apatis, dan berkhianat.²¹⁰ Dua belas bulan kemudian, pada Agustus 1984, Lord Avebury, Ketua Kelompok Hak Asasi Manusia di Parlemen Inggris, merasa terpancang untuk mengatakan kepada Sekretaris Jenderal bahwa Laporan Perkembangannya hanya mengacu kepada komunikasi antara Portugal dan Indonesia, dan tidak mengandung “indikasi adanya upaya untuk berunding dengan Front Revolusioner bagi Timor-Leste Merdeka (Fretilin) ataupun partai-partai Timor lainnya.”²¹¹

385. Namun, keputusan untuk menggunakan sistem internasional ternyata tepat. Isu Timor-Leste tetap ada dalam agenda PBB, selamat dari pengambilan suara yang berpotensi fatal dalam Sidang Umum, dan harapan untuk solusi diplomatik tidak memudar serta bahkan berkembang kembali saat angin segar berbalik mendukung Timor-Leste pada 1990-an. Resistansi tetap terfokus pada PBB dan memberi perhatian lebih pada forum-forum PBB lainnya, terutama pada rapat-rapat tahunan Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa dan Komite Khusus Dekolonisasi PBB di New York, yang keduanya memperbolehkan debat mengenai penentuan nasib sendiri. Selain melobi dan membuat pernyataan sendiri, kelompok Resistansi berhasil mendorong partisipasi masyarakat sipil. (Lihat bagian mengenai masyarakat sipil internasional di bagian 6 di bawah, paragraf 429 - 526.)

* 27 negara di Afrika yang mendukung Timor-Leste, 6 menolak, dan 13 abstain.

† José Ramos-Horta percaya bahwa Sekretaris Jenderal PBB Kurt Waldheim (1972-1981) harus berbagi kesalahannya atas kegagalan Dewan Keamanan menyelesaikan resolusi 1976 atas Timor-Leste. Dewan Keamanan tidak lagi membahas isu tersebut sampai pada 1999. *Funu: The Unfinished Saga of East Timor*, The Red Sea Press, 1987, hal. 122.

Pembentukan kembali partai-partai

386. Sejak 1980-an, Fretilin dan UDT mengalami sejumlah perubahan yang memengaruhi upaya diplomasi internasional mereka, dan secara bertahap berkontribusi membentuk suatu koalisi parsial guna mempromosikan upaya penentuan nasib sendiri.

387. Pada 1981, setelah hampir hancur, Fretilin membentuk Dewan Revolusioner Resistansi Nasional (Conselho Revolucionária da Resistência Nacional, CRRN). Dewan itu dibentuk di Timor-Leste dengan masukan dari Abílio Araújo di Lisbon. Dari sudut pandang kampanye diplomatik, kontribusi yang penting dari badan baru ini adalah menunjukkan munculnya kembali Fretilin, dan Resistansi di dalam dihubungkan kembali dengan perwakilan eksternal setelah beberapa tahun terisolasi secara paksa antara satu dengan lainnya. Di luar Timor-Leste, CRRN sendiri tidak banyak diketahui. Namun, pertemuan Xanana Gusmão dengan komandan Pasukan Indonesia di Timor-Leste, Kolonel Purwanto, pada Maret 1983 di Lariguto, yang juga dihadiri Mario Carrascalão, dipublikasikan luas secara internasional dan sangat bermanfaat untuk mengembalikan dukungan kepada Timor-Leste.* Rencana Perdamaian Fretilin, yang diluncurkan secara internasional oleh José Ramos-Horta pada Juni 1984 atas inisiatif dari dalam Timor-Leste, memberi perhatian baru pada solidaritas internasional untuk bekerja dengan tujuan spesifik yang secara langsung mewakili Timor-Leste dalam pencarian penyelesaian secara tuntas di bawah naungan PBB. Permintaan untuk dilibatkan di dalam proses PBB, bersama dengan Portugal dan Indonesia sebagai partai yang paling “bersangkutan secara langsung”, menjadi fokus utama Resistansi dan bagian advokasi masyarakat sipil, dan oleh para pemimpin Timor dicanangkan dalam sejumlah besar dokumen dan forum.†

388. Pembangunan kembali UDT terjadi di luar Timor-Leste dan melibatkan usaha memperkuat partai itu di Australia. UDT mulai hadir di Australia setelah João Carrascalão bermigrasi ke Sydney dari Portugal pada 1978 dan bergabung dengan para anggota serta pendukung UDT yang telah menetap di Australia sebagai pengungsi sejak perang saudara. Dengan didukung oleh Domingos de Oliveira, Lucio Encarnação, António Nascimento, Fausto Soares, dan teman-teman lainnya, kepemimpinan UDT harus menghadapi banyak tantangan baik secara individual maupun politik. João Carrascalão memberitahu Komisi bahwa kehidupan di Australia sangat sulit, dan bahwa pekerjaan pertamanya di Sydney adalah di sebuah pabrik plastik, bekerja 12 jam sehari dengan rotasi kerja (*shift*), dan belakangan ia terpaksa mengambil pekerjaan kedua sebagai pembersih bus dan kantor agar

* Sebuah pertemuan publik yang dihadiri 1.500 orang diadakan di Melbourne pada 1983 dalam rangka menyambut Abílio Araújo dan Roque Rodrigues pada kunjungan resmi pertama Fretilin ke Australia setelah pencabutan pelarangan oleh Pemerintah Australia, dan untuk mendengarkan laporan mereka mengenai pembicaraan perdamaian Lariguto antara Fretilin dan Indonesia.

† Sebagai contoh, surat Xanana Gusmão kepada Sekretaris Jenderal PBB, 7 Agustus 1985, dikirim oleh misi São Tomé (Dokumen PBB S/17592); surat kepada Boutros Boutros Ghali (31 Januari 1992), dan kepada Nelson Mandela (15 Mei 1992). Surat pertama Xanana Gusmão kepada PBB atas nama CRRN tertanggal 14 Oktober 1982 tetapi lebih menyerupai laporan situasi yang bersifat menentang ketimbang seruan langsung untuk tindakan PBB.

dapat mengumpulkan uang untuk bepergian ke luar negeri atas nama Timor-Leste. Pengungsi UDT lainnya di Australia punya pengalaman serupa. Ia juga harus menghadapi ketidakpercayaan terhadap UDT dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan beberapa bagian dalam diaspora Timor di Australia.

Saya sangat terlibat dalam Resistansi di luar negeri. Pada awalnya banyak yang tidak percaya bahwa saya bukan pro-integrasionis. Karena kakak saya gubernur, dan UDT tengah menderita dampak propaganda awal yang mengatakan bahwa UDT menginginkan integrasi... Jadi, sangat tidak mudah, banyak orang tidak percaya. Mungkin bahkan rekan-rekan saya dari kalangan pemimpin Resistansi tidak percaya kalau saya tidak pernah ada di pihak Indonesia.²¹²

389. Setelah berdiri, UDT mengikutsertakan suaranya dalam usaha menuntut penentuan nasib sendiri. Pada 1982, João Carrascalão merupakan salah satu dari dua orang Timor yang bersaksi dalam Audiensi Senat Australia tentang Timor-Leste.²¹³ Pada November 1987, ia mewakili UDT dalam Konferensi Konsultatif Kristen untuk Asia-Pasifik yang pertama mengenai Timor-Leste, yang diadakan di Manila. Konferensi itu menuntut partisipasi langsung dari pihak Timor dalam perbincangan untuk menyelesaikan konflik.

390. Upaya untuk menjadikan partai sebagai alat yang lebih efektif dan meyakinkan bagi aspirasi masyarakat Timor dirintangi oleh ketidaksetujuan internal di antara para pemimpin UDT di Lisabon dan Australia. Masalah ini akhirnya diselesaikan pada 1993 ketika partai itu, dengan dibantu oleh generasi muda pemimpin-pemimpin UDT yang berkomitmen pada reformasi demokratis, mengadakan kongres di Portugal—pertama kali diadakannya pertemuan seperti ini sejak perang saudara.²¹³ Kongres memilih João Carrascalão sebagai presiden dan mengeluarkan Francisco Lopes da Cruz, presiden pertama UDT, atas “pengkhianatan terhadap partai, bangsa, dan negara.”²¹⁴ Sejumlah komite regional dibentuk untuk melakukan kampanye yang lebih teratur bagi Timor-Leste. Zacarias da Costa tanggung jawab atas relasi internasional dan selama lima tahun berikutnya UDT membawa kasus penentuan nasib sendiri di dalam semua forum PBB dan pertemuan besar masyarakat sipil internasional. Usaha ini berjalan efektif terutama di Eropa, di mana usaha ini antara lain digabungkan dengan lobi oleh Portugal, Fretilin, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, untuk membuat oposisi yang bertambah kuat oleh Parlemen Eropa terhadap penguasaan Indonesia di Timor-Leste.

391. Pada 1993, Fretilin juga menangani masalah persaingan kekuasaan yang telah berlangsung lama antara para pemimpin delegasi eksternal: Mari Alkatiri, Abilio Araújo, dan José Ramos-Horta. Para aktivis Timor sangat kritis terhadap perselisihan internal itu dan terus mengimbau penyelesaiannya. Mereka percaya perselisihan itu memecah-belah Fretilin di luar negeri, mengalihkan perhatian para pemimpin dari peran utama mereka, dan menciptakan kekacauan dalam

.....
* Saksi lainnya adalah João Gonçalves, petugas sosial untuk komunitas Timor-Leste.

Resistansi di Timor-Leste, ketika mereka menerima informasi dari luar mengenai salah satu anggota yang menjelekkan anggota lain. Mereka juga kritis terhadap ketidakaktifan Abilio Araújo dan Guilhermina Araújo.²¹⁵ Pengunduran diri José Ramos-Horta dari Fretilin pada 1988 dan pemilihannya sebagai Perwakilan Khusus CNRM, diikuti oleh keputusan Abilio Araújo untuk mengambil kepemimpinan Fretilin, berakibat pada menajamnya perselisihan itu. Pada Agustus 1993, atas inisiatif Mari Alkatiri, yang ketika itu menjabat wakil ketua, Delegasi Eksternal Fretilin mencabut jabatan Abilio Araújo sebagai ketua delegasi dan perwakilan Fretilin untuk Eropa dan Portugal.*

Dari perbedaan ke persatuan: pencarian persatuan dan perdamaian

392. UDT dan Fretilin mengakui bahwa demi kepentingan Timor-Leste, sangat penting untuk menyetujui suatu *modus vivendi*. João Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa hubungan pada tahun-tahun awal “amat sangat buruk”, terutama pada tingkat masyarakat. Pada 1976, João dan Mari Alkatiri bertemu secara rahasia di Portugal untuk mendiskusikan masalah ini, tetapi memutuskan bahwa “saat ini masih sulit untuk bekerjasama”. Ia menyatakan “perlu waktu lama sebelum rakyat menyadari bahwa perjuangan tidak dapat dilakukan secara terpisah”.²¹⁶

393. Pembentukan Persatuan Nasionalis (*Convergencia Nacionalista*) pada 1986 merupakan langkah maju. Ide tersebut timbul dari diskusi informal antara José Ramos-Horta dan João Carrascalão, tetapi didorong oleh Anacoreto Correia, seorang anggota parlemen Portugis, yang berkunjung ke Timor-Leste pada Juli 1986. Persatuan ini bersifat eksternal bagi Timor-Leste, dan tidak mendapat dukungan luas maupun berkelanjutan dari partai manapun,[†] tetapi para penandatanganannya—Moises do Amaral (Ketua Komisi Politik UDT) dan Abilio Araújo (Ketua Delegasi Eksternal Fretilin)—berpendapat bahwa memperlihatkan adanya kesatuan sangat penting untuk mengimbangi dukungan internasional bagi Timor-Leste, dan untuk memenangi dukungan lebih lanjut di Portugal dan Eropa.[‡] José Ramos-Horta percaya bahwa usaha memperlihatkan kesatuan memang membantu:

* Abilio Araújo dikeluarkan dari Fretilin karena kolaborasinya dengan Indonesia. Ia sekarang menjabat sebagai Presiden Partai Nasionalis Timor (Partido Nacionalista Timorese) yang didirikan di Dili pada 15 Juli 1999 untuk memasyarakatkan otonomi yang luas dalam Indonesia yang berdasar pada sebuah “kebijakan cara ketiga” yang menawarkan pilihan yang tidak melibatkan baik “kediktatoran” CNRT maupun integrasi penuh dengan Indonesia. PNT menerima hasil pemilihan 1999 dan peran UNTAET sebagai pihak berwenang yang sah di Timor-Leste selama masa transisi menuju kemerdekaan. Sebagai musisi yang terampil, Abilio Araújo mengubah musik untuk lagu kebangsaan *Pátria, Pátria* dan lagu-lagu Timor yang sangat dikenal yaitu *Foho Ramelau* dan *Funu nain Falintil*.

† João Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa *Convergencia Nacionalista* “tidak dianggap serius pada saat itu baik oleh UDT maupun Fretilin” dan bahwa terdapat kecurigaan adanya keterlibatan Indonesia. (Wawancara CAVR, Dili, 30 Juli 2004.)

‡ Persatuan Nasionalis mendesak Portugal untuk mempercepat pembelaannya bagi Timor-Leste dalam pembicaraan yang disponsori oleh PBB, dan mengembangkan suatu “rencana dinamis untuk bertindak” untuk dilaksanakan ketika Portugal bergabung dengan Uni Eropa pada 1987. (Krieger, hal. 279.)

Memang membantu karena Portugal waktu itu memanfaatkan perselisihan antara Fretilin dan UDT, untuk membenarkan mereka yang tidak berbuat apa-apa. Memang membantu, tapi benar-benar suatu perjuangan tanpa akhir untuk terus mempertahankannya.²¹⁷

394. Fretilin memberi kelonggaran pertama dari sejumlah kelonggaran yang diberikannya kepada UDT. Fretilin mengakui UDT sebagai sesama partai dan menyetujui adanya sistem multipartai di masa depan. Pernyataan-pernyataan Persatuan Nasionalis mendeskripsikan UDT dan Fretilin sebagai “dua organisasi nasionalis Timor-Leste yang paling penting”²¹⁸ dan “sah”, serta meminta Portugal mendanai usaha diplomatik kedua partai tersebut. Pada 1987, delegasi Fretilin dan UDT bersaksi kepada Komite Dekolonisasi di New York mengenai dukungan untuk penentuan nasib sendiri. UDT mengakui kebungkamannya yang lama dan ketidakhadirannya di PBB. UDT menyangkal pernyataan Indonesia bahwa UDT mendukung integrasi, dan menyatakan menghendaki kemerdekaan serta mengatakan bahwa “kami ingin bangsa kami memilih kedaulatan, melalui suatu proses demokratis di bawah pengawasan PBB”.²¹⁹

395. Pada Desember 1988, dibentuk sebuah organisasi payung nasionalis baru yaitu Dewan Nasional Perlawanan Maubere (Conselho Nacional da Resistência Maubere, CNRM). CNRM mencerminkan suatu revisi radikal terhadap doktrin dan strategi yang telah ditandatangani 12 bulan sebelumnya, ketika Xanana Gusmão mengeluarkan pernyataan bahwa dia menolak Marxisme, mendeklarasikan Falintil sebagai pasukan netral secara politik, dan keluar dari Fretilin.²²⁰ Yang memberi inspirasi pada perjuangan, kata Xanana, adalah keinginan untuk hidup bebas dari pendudukan asing, bukan revolusi. Ia menyatakan bahwa blok Timur bersikap tak acuh terhadap Timor-Leste. Istilah ‘revolusioner’ diganti dengan ‘Maubere’, CNRM pun diganti menjadi CRRN, menandakan bahwa ideologi politik harus dinomorduakan di bawah kemerdekaan nasional, serta menyiratkan pendekatan nonpartisan yang inklusif. Perubahan ini memberi dampak besar terhadap Timor-Leste. Mario Carrascalão mengatakan:

Ketika Xanana mengatakan bahwa ia bukan Fretilin, hanyalah komandan Falintil, itulah saat perang ini mulai dimenangi. Orang-orang Apodeti dan UDT yang sebelumnya menjadi musuh Fretilin juga dapat bergabung dengan gerakan ini.²²¹

396. Namun, UDT masih merasa istilah ‘Maubere’ tidak cukup inklusif dan secara formal menunda keanggotaan CNRM, walaupun dalam praktik tetap kooperatif.

397. Perubahan-perubahan ini juga memberi dasar kuat untuk meluncurkan kampanye diplomatik baru yang efektif. Muncul menjelang akhir Perang Dingin,

.....
* João Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa istilah ‘Maubere’ tidak dikenal di beberapa bagian di Timor-Leste dan tidak akurat: “Tidak semua dari kami Maubere”. (Wawancara CAVR, 30 Juli 2004. Lihat juga Bagian 3: Sejarah Konflik untuk diskusi mengenai asal-usul istilah itu.)

perubahan tersebut memberi tantangan pada saat yang tepat bagi persepsi internasional bahwa gerakan kemerdekaan adalah proyek sayap kiri ekstrem serta merupakan ancaman bagi Indonesia dan stabilitas wilayah. Bahasa hak-hak asasi manusia dan demokrasi menggantikan retorika militan di masa lalu. Menurut Xanana Gusmão, CNRM:

Berkomitmen untuk membangun bangsa yang bebas dan demokratis, berdasarkan penghormatan pada kebebasan berpikir, berserikat, dan berekspresi, serta menjunjung setinggi-tingginya Hak Asasi Manusia Universal. Sistem multipartai dan ekonomi pasar akan menjadi fondasi Timor-Leste merdeka... Ia akan menjadi negara yang bebas dan tidak bersekutu, dengan tujuan kuat menjadi anggota ASEAN, untuk turut berperan bagi stabilitas regional.[†]

398. Pendekatan baru ini sudah diperhitungkan secara internasional dengan penunjukan José Ramos-Horta sebagai perwakilan pribadi Xanana Gusmão dan perwakilan khusus CNRM di luar negeri. Dengan menghubungkan Resistansi dengan Ramos-Horta, yang kepercayaan sosial demokrat dan pandangan hak asasi manusianya lebih dapat diterima secara internasional bila dibandingkan dengan citra Marxis Abilio Araújo, menunjukkan besarnya perbaikan itu. Pada awalnya pemilihan atas dirinya tidak diterima dengan baik oleh UDT dan Fretilin, yang takut bahwa peran mereka akan melemah.[†] Strategi baru itu mewajibkan mereka memomorduakan kepentingan partai dan menonjolkan sifat nasionalis, serta menyelenggarakan berbagai kampanye dengan aktivis Timor dari luar barisan mereka yang jumlahnya semakin bertambah.

399. Sebagai bagian dari ofensif diplomatik baru, Resistansi meluncurkan rencana perdamaian lain yang dikembangkan oleh José Ramos-Horta atas dasar perundingannya dengan Delegasi Eksternal Fretilin dan Xanana Gusmão. Ramos-Horta menyusun rencana itu di Darhamsala, markas besar Dalai Lama, dan mengumumkan rencana itu untuk kali pertama di Brussel pada April 1992. Rencana tersebut terdiri atas lima butir pendekatan baru CNRM dan satu butir rencana perdamaian yang dikeluarkan oleh Xanana Gusmão pada 5 Oktober 1989 dan telah didukung oleh Persatuan Nasionalis UDT dan Fretilin.²²²

400. Rencana itu terbagi dalam tiga fase. Dalam fase pertama, yang berlangsung selama dua tahun, Indonesia akan tetap berkuasa, tapi akan diperkenalkan sejumlah langkah guna membangun kepercayaan terhadap pihak Indonesia,

.....
* Barbedo de Magalhães, *East Timor: Indonesian Occupation and Genocide*, Oporto University, Portugal, 1992, hal. 43. Makna dari perubahan-perubahan ini, cara, dan intinya, dapat diperoleh dari perbandingan dengan pengaduan tajam Nicolau Lobato terhadap Xavier do Amaral pada 1977 untuk kejahatan-kejahatan revolusioner. (Pernyataan Komite Sentral Fretilin atas "Pengkhirnatan Besar Xavier do Amaral," Radio Maubere, 14 September 1977.)

† Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 26 Mei 2004. *The Communiqué of the Nationalist Convergence of Timor*, 10 November 1989, tentang "peran yang tak tergantikan" dari Fretilin dan sebagai perwakilan masyarakat Timor-Leste. (Krieger, hal. 282.)

termasuk penarikan pasukan dan penerimaan pengawasan PBB atas hak asasi manusia di Timor-Leste. Pada fase kedua, Timor-Leste diberi otonomi penuh yang dapat diperpanjang hingga sepuluh tahun. Pada fase ketiga, kepastian status Timor-Leste akan ditentukan melalui referendum. Rencana tersebut bermaksud menekan Pemerintah Soeharto dengan menawarkan jalan ke luar yang terhormat, serta memperkenalkan Resistansi sebagai pemeran utama yang lebih konstruktif dibandingkan yang lainnya. José Ramos-Horta berkata:

*Ini juga berarti bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, serta komunitas internasional, untuk menunjukkan sikap tanggungjawab, kedewasaan, dan kehati-hatian para pemimpin Resistansi Timor-Leste.*²²³

401. Tanggapan di dalam partai, masyarakat sipil internasional, dan diaspora Timor-Leste pada awalnya negatif. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi:

*Saya harus mempertahankannya begitu sering, baik di Portugal maupun di komunitas Timor, dengan Fretilin dan UDT. Ini sangat kontroversial pada awalnya, karena kata 'otonomi' sangat tabu ketika itu, tapi kemudian sebagian besar orang setuju dengan ini.*²²⁴

402. Pemerintah Indonesia juga bersifat curiga. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi:

Saya ingat pernah berbicara dengan Ali Alatas di New York tanggal 18 Oktober 1994, pertemuan resmi kami yang pertama di New York. Alatas mengatakan, "Rencana damai Anda itu sepertinya merupakan batu loncatan menuju kemerdekaan".

403. Jose Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi bahwa Menteri Alatas "memang benar". Tapi, ia menjelaskan bahwa Indonesia akan diuntungkan jika dapat memanfaatkan kesempatan itu secara konstruktif, dan rakyat pun puas dengan otonomi setelah sepuluh tahun.

404. Sebuah jaringan perwakilan internasional dan penghubung CNRM untuk mempromosikan rencana itu ditempatkan di Portugal, Kanada, Masyarakat Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, serta wilayah sekitarnya. Jaringan itu melibatkan diplomat generasi baru seperti José Amorim Dias, wakil CNRM di Uni Eropa sejak 1993, dan Constancio Pinto,* wakil CNRM di Amerika Serikat dan Kanada sejak 1994. Usaha mereka didukung Pusat Dukungan Internasional Timor-Leste (ETISC) yang didirikan di Darwin oleh Juan Federer, yang juga melakukan pencarian dana dan memberi bantuan pribadi kepada José Ramos-Horta. Pada saat yang sama, José Ramos-Horta meneruskan bekerjasama langsung dengan Fretilin

* Sebelum meninggalkan Timor-Leste pada 1991, Constancio Pinto telah bertanggung jawab atas nama CNRM dalam mengatur semua kegiatan klandestin di kota-kota dan desa-desa. Lihat Constancio Pinto dan Matthew Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance*, Boston: South End Press, Boston, 1997.

dan UDT, sesuai dengan peran masing-masing, tetapi menegaskan perlu adanya koordinasi. Untuk kepentingan ini, pada 1995 dibentuk sebuah Komite Pengurus Garis Depan Diplomasi (menggantikan Persatuan Nasionalis), dan tanggungjawab dibagi antara kedua partai itu.

405. Di atas pertumbuhan kesadaran internasional setelah terjadinya pembantaian Santa Cruz, José Ramos-Horta menggunakan rencana itu untuk memperluas kampanye, membuka jalan untuk membawa kasus Timor-Leste kepada lembaga-lembaga penting, seperti Parlemen Eropa, Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, Royal Institute of International Affairs di London, dan perkumpulan pers di Thailand dan Australia, serta mengarahkan usaha Resistansi pada jalan yang baru dan positif.

406. Semua usaha tersebut memuncak dengan pemberian penghargaan Nobel Perdamaian kepada Uskup Belo dan José Ramos-Horta pada 1996. Keikutsertaan José Ramos-Horta merupakan dukungan kuat dari lembaga-lembaga yang paling terhormat di dunia untuk diplomasi Resistansi dan rencana perdamaianya. Penghargaan itu menandai pengakuan legitimasi masalah Timor-Leste dan dimulainya fase baru dalam perjuangan. Ramos-Horta mempromosikan rencana itu dalam pidato penerimaan hadiah Nobel. Dalam pernyataannya, Komite Nobel Norwegia menyatakan harapan, “bahwa penghargaan ini akan mendorong upaya-upaya untuk mencari solusi diplomatik bagi konflik di Timor-Leste, yang berdasarkan pada hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri”.²²⁵ Sekretaris Jenderal PBB menyatakan pendapat yang sama dalam ucapan selamatnya atas penghargaan itu, dan beberapa minggu kemudian, pada Februari 1997, Kofi Annan, Sekretaris Jenderal yang baru, menunjuk Jamsheed Marker sebagai utusan pribadinya untuk Timor-Leste guna mengaktifkan kembali proses PBB.

407. Dengan bantuan Pemerintah Portugis, pada 1998 CNRM menyelenggarakan konvensi di Peniche, Portugal, yang dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari Timor-Leste. Pertemuan itu diadakan di luar negeri agar Timor-Leste dapat memanfaatkan dorongan internasional yang baru dan, dalam pernyataan Agio Pereira, “untuk memperkenalkan suatu garis depan kesatuan nasional dan Xanana Gusmão sebagai pemimpin”.²²⁶ Konvensi itu memperkuat kesatuan dengan menghapus, atas instruksi eksplisit dari Xanana Gusmão, kata ‘Maubere’ dari namanya sebagai penghormatan terhadap UDT. Dengan demikian namanya berubah menjadi Conselho Nacional da Resistência Timorese (Dewan Nasional Resistansi Rakyat Timor, CNRT), yang menyambut baik orang Timor yang sebelumnya pernah berkolaborasi dengan Indonesia, serta mengakui peranan Gereja.* Pertemuan ini juga mengonfirmasikan komitmen Resistansi terhadap demokrasi dan pluralisme, dengan mengadopsi sejenis Magna Carta mengenai kebebasan, hak, kewajiban, dan jaminan hak asasi manusia untuk masyarakat Timor-Leste. Konvensi itu disambut secara universal sebagai peristiwa unik. Dalam pernyataan Pemerintah Australia dikatakan bahwa konvensi itu berhasil menyatukan “pihak-pihak yang bertikai

* Resistansi internal dan Xanana Gusmão, yang dipenjara di Jakarta, diwakili pada pertemuan ini oleh Fr Filomeno Jacob SJ, dan Fr Domingos Maubere Soares.

dalam perang saudara, yaitu UDT dan Fretilin, ke dalam suatu koalisi—hal yang belum pernah dicapai sebelumnya” serta memperoleh persetujuan “atas pemilihan komandan Falintil Xanana Gusmão, yang ada di penjara, sebagai Presiden CNRT dan pemimpin utama Resistansi”.²²⁷

408. Resistansi bergabung dengan All-Inclusive Intra-East Timorese Dialogues (AIETD) yang disponsori oleh PBB dan dimulai pada 1995, dengan posisi yang kuat dan mampu memanfaatkannya. Pada AIETD keempat, 1998, José Ramos-Horta dengan dukungan dari UDT dan Fretilin memperoleh mayoritas dukungan komunitas Timor untuk berpartisipasi langsung dalam pertemuan antara Portugal dan Indonesia yang disponsori PBB. Jamsheed Marker melaporkan bahwa pada saat yang sama, negara-negara Barat dan diplomat-diplomat PBB mulai terlibat dalam perundingan langsung dengan Xanana Gusmão di penjara dan dengan perwakilan Resistansi lainnya.²²⁸ “Hak atas dialog” akhirnya berhasil direbut.’

409. Pada April 1999, CNRT mengadakan konferensi perencanaan di Melbourne. Inisiatif semacam ini dan keputusan CNRT untuk menarik Falintil serta mengatur kampanye kemerdekaan yang tertib guna menghindari terjadinya provokasi oleh milisi pro-otonomi,²²⁹ memperdalam kepercayaan internasional terhadap Resistansi pada periode menjelang pemungutan suara pada Agustus. Agio Pereira mengatakan kepada Komisi:

*Akan sangat sulit bagi PBB untuk menegosiasikan Kesepakatan 5 Mei 1999 dengan Indonesia apabila Resistansi Timor terlihat pecah atau berantakan.*²³⁰

410. Diakuinya legitimasi Resistansi oleh PBB dengan menggunakan nama dan bendera CNRT pada kartu pemungutan suara 30 Agustus 1999 merupakan kepuasan yang besar dan suatu kebanggaan. Tapi, pengakuan yang paling berharga berasal dari rakyat Timor, yang mendukung Resistansi beserta komponen-komponen politiknya pada hari bersejarah tersebut.

Diaspora

411. Diaspora Timor-Leste, secara umum, bukan bagian dari kampanye diplomatik formal Resistansi untuk penentuan nasib sendiri. Meskipun demikian, kehadiran dan kegiatan komunitas-komunitas Timor di luar negeri secara signifikan mengangkat profil isu ini di banyak negara, dan memberi tambahan sumberdaya serta keahlian yang sangat penting bagi kampanye formal. Diaspora semakin berperan dan efektivitasnya diakui oleh para pemimpin politik Timor-Leste. Banyak anggota utama diaspora yang kembali ke Timor-Leste selama dan setelah 1999 untuk membantu membangun negara baru ini.

* Ini adalah referensi untuk laporan Fretilin mengenai pembicaraan singkat Xanana Gusmão dengan Kolonel Purwanto pada 1983 yang berjudul “Fretilin conquers the right to dialogue”, The FRETILIN External Delegation, Lisabon, 1983.

412. Pada puncaknya, diaspora itu terdiri atas 20.000 orang Timor di Australia, sekitar 10.000 di Portugal, dan beberapa lagi tersebar di Makau, Mozambik, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, dan negara-negara lainnya. Mayoritas diaspora itu terdiri atas para pengungsi perang saudara 1975 antara UDT dan Fretilin, baik yang mengungsi langsung ke Australia atau yang berhasil pergi ke Portugal melalui Timor Barat. Banyak yang pergi ke Portugal akhirnya pindah ke Australia untuk bergabung dengan sanak-saudaranya, agar lebih dekat dengan Timor-Leste dan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Dari tahun ke tahun jumlah mereka semakin bertambah dengan anggota-anggota keluarga, yang perjalanannya dari Timor-Leste secara resmi diatur oleh Palang Merah Internasional, para pengungsi politik serta yang lain, yang melarikan diri melalui Indonesia, baik yang diam-diam secara individual dengan menggunakan jalur yang rumit, termasuk dengan menyuap pejabat Indonesia, ataupun melalui permohonan suaka di kedutaan besar asing di Jakarta.^{*} Mereka yang keluar melalui kedutaan besar sejak 1993 atau yang pergi setelah 1995, memberi kontribusi penting karena sangat termotivasi secara politik dan dapat berbicara berdasarkan pengetahuan pribadi mengenai pendudukan, serta tidak terkait pada afiliasi-afiliasi politik 1975. Dengan cepat dan mudah mereka bergabung dengan CNRM serta organisasi-organisasi solidaritas dan kegiatan di Inggris, Irlandia, Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Portugal, dan Australia. Pada 1995, 1.600 orang tiba di Australia, angka terbesar sejak perang saudara. Namun sejak 1999, mereka cenderung kembali ke negara asalnya. Walaupun sebagian besar komunitas umum tetap memilih untuk tinggal di luar negeri, mayoritas pemimpin utama diaspora telah kembali ke Timor-Leste atau mempertahankan keberadaan mereka di kedua tempat.[†]

413. Diaspora itu berjumlah sedikit, terpisah-pisah secara politik, tersebar-sebar, dan pada umumnya miskin. Banyak di antara mereka yang memulai hidup baru di kamp-kamp pengungsi dan membawa bekas luka serta antipati terhadap perang saudara dan invasi Indonesia. Di Portugal, jumlah orang Timor yang baru tiba tidak sebesar jumlah orang-orang dari bekas koloni Portugis di Afrika. Mereka menemui kesulitan mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan, sehingga banyak orang Timor tinggal di kamp-kamp di Lisabon selama bertahun-tahun.

414. Di Australia, orang Timor memiliki kesulitan dalam bahasa, kebudayaan, dan struktur negara tersebut. Abel Guterres bercerita kepada Komisi:

Teman-teman kami yang di Portugal bisa bicara bahasa Portugis, tapi kami di Australia punya masalah besar: kami tidak mengerti bahasanya... Kata pertama yang kami tahu adalah 'yes'. Kami berkunjung ke rumah teman, dan mereka bertanya: 'Mau kopi apa teh?'

.....
^{*} Kampanye untuk mempersatukan Keluarga Timor di Australia (Reunite in Australia the Families of Timor, RAFT) berhasil mengumpulkan beribu-ribu dolar dari organisasi-organisasi non-pemerintah Australia dan memberikan dana pinjaman untuk membantu keluarga-keluarga Timor, tanpa peduli afiliasi politik mereka, untuk mendanai sanak saudara bergabung dengan mereka di Australia.

[†] Untuk studi mengenai komunitas diaspora orang Timor di Sydney, lihat Amanda Wise *No Longer in Exile? Shifting Experiences of Home, Homeland and Identity for the East Timorese Refugee Diaspora in Australia in the Light of East Timor's Independence*, University of Western Sydney, 2002. Lihat juga disertasi Pascoela Barreto tentang diaspora Timor-Leste di Portugal.

*Dan kita semua menjawab 'yes', sehingga mereka akan bawa kopi dan teh sekaligus.*²³¹

415. Mereka menetap terutama di daerah pinggiran di kota-kota besar dan mencari pekerjaan di manapun mereka bisa mendapatkannya, seperti di pabrik sebagai buruh lepas, dan di perusahaan transportasi umum. Faktor-faktor ini memperlambat serta menyulitkan perkembangan komunitas dan organisasi politik. Mereka dibantu dalam proses ini oleh organisasi sosial, kelompok-kelompok masyarakat dan Gereja, serta pejuang-pejuang laki-laki dan perempuan yang terkemuka dalam kelompok mereka sendiri.

416. Kesuksesan dalam membangun komunitas dan penyebaran budaya politik nasionalis kepada generasi penerus merupakan prestasi yang luarbiasa. Di Portugal, Makau, dan Australia, komunitas-komunitas itu membentuk organisasi politik, budaya, dan olahraga, mengadakan pertemuan, dan terus menginformasikan anggotanya melalui siaran radio yang mereka kelola sendiri, serta melalui surat edaran. Gereja Katolik berperan penting sebagai tempat pertemuan yang netral dan sumber spiritual, budaya, dan pastoral, terutama di mana terdapat pastor-pastor dari Timor. Pembentukan komunitas-komunitas ini merupakan sikap pembangkangan dan penentuan nasib sendiri orang Timor di lingkungan asing, dan melahirkan sumberdaya baru yang menambah kapasitas dan penjangkauan diplomatik Timor-Leste secara signifikan.

417. Walaupun sering mengalami rintangan besar yang disebabkan oleh warisan perang saudara, diaspora memberi dampak di negara-negara tempat komunitas mereka kuat, dan dalam beberapa kasus menyamai usaha solidaritas lainnya. Luisa Teotonio Pereira mengatakan kepada Komisi:

*Masyarakat Timor di Portugal selalu bertahan dengan organisasi-organisasi mereka sendiri [dan hanya] sekali-sekali diundang berpartisipasi dalam struktur-struktur Portugis. Mungkin hanya sekali mereka pernah bergabung sebagai warganegara Portugis yang setara: dalam kasus Komisi Kebebasan bagi Xanana, Kebebasan bagi Timor [Comissão Liberdade para Xanana, Liberdade para Timor], yang dibentuk pada 1993.*²³²

418. Itu juga berlaku bagi bagian-bagian komunitas Timor di Australia. Walaupun memulainya secara perlahan, mereka membentuk persekutuan dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan saling mendukung melalui protes, lobi, penyebaran informasi, pencarian dana, serta kegiatan-kegiatan budaya, keagamaan, dan politik—termasuk, pada tahun-tahun belakangan, konser dan produksi CD musik, pameran, dan pertunjukan karya teater profesional. Hal ini tidak selalu mudah. Abel Guterres mengatakan kepada Komisi:

Ketika kami berdemonstrasi di Departemen Luar Negeri atau Kedutaan Indonesia, beberapa orang akan bilang ke atasannya bahwa mereka sakit, tapi kemudian muncul di televisi pada demonstrasi.

Kalau atasannya memahami situasinya, ia akan mengizinkan mereka ambil waktu libur; tapi beberapa ada yang dipecat, dan kalau sudah dipecat—bagaimana mau makan?²³³

419. Beberapa orang mempelajari ilmu perdagangan dan bisnis serta mengambil kursus tingkat menengah dan di universitas, guna mempersiapkan diri mengabdikan di Timor-Leste setelah kemerdekaan. Abel Guterres mengatakan kepada Komisi:

Sebagian orang memberi satu persen, sebagian lagi sepuluh persen, dua puluh, tiga puluh, empat puluh sampai seratus persen hidupnya untuk Timor-Leste. Semua ikut berperan. Mungkin hanya hal-hal kecil saja, tapi mereka semua melakukan sesuatu.²³⁴

420. Orang-orang Timor juga terlibat dalam penjangkauan internasional dengan mendukung advokasi para diplomat dalam forum-forum internasional atau, dengan bertambahnya kepercayaan diri, mereka yang mewakili Timor-Leste dalam melakukan pendekatan terhadap pemerintah-pemerintah asing atau di konferensi-konferensi internasional. Selain membentuk dan mengurus organisasi untuk mempertahankan identitas dan solidaritas komunitas mereka, diaspora Timor juga membentuk organisasi-organisasi yang efektif untuk memberikan dukungan kemanusiaan, advokasi, hak asasi manusia, dan dukungan lainnya kepada Timor-Leste secara langsung.[†]

421. Para pemimpin Timor-Leste mengakui dan mendorong kontribusi diaspora. José Ramos-Horta yang tinggal di tengah komunitas diaspora di Australia dan sering berinteraksi dengan mereka, dengan visi ke depan meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam misinya. Setelah penangkapan atas dirinya, Xanana Gusmão mengirim surat-surat kepada diaspora untuk memperkuat kepercayaan mereka bahwa diaspora Timor adalah bagian dari Resistansi seperti mereka yang ada di Timor-Leste. Dalam sebuah surat yang dialamatkan kepada Xana Bernades, tertanggal 9 Juni 1992, Xanana menulis:

Saya tahu, bahwa Anda "independen" (dari partai-partai politik), tapi bagaimanapun juga Anda satu dengan kami. Anda adalah bagian kami. Dan kami, sebagai pejuang tua bangsa ini, bangga pada Anda.[‡]

.....
* Di Eropa, misalnya, ini mencakup tur-tur oleh orang Timor yang bermarkas di Portugal yang berkampanye melalui Eropa, menari, menyanyi, dan menunjukkan budaya Timor-Leste. Contoh-contoh lain adalah partisipasi perempuan diaspora Timor dalam Konferensi Dunia mengenai Perempuan yang diadakan di Nairobi pada 1985, konferensi berikutnya di Beijing, pertemuan-pertemuan Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan Gereja, dan advokasi kepada Australia, Selandia Baru, dan pemerintah lainnya.

† Dua contoh penting adalah East Timor Relief Association (ETRA), yang dibentuk di Sydney pada 1992, dan Pusat Hak Asasi Timor-Leste (East Timor Human Rights Centre, ETHRC), yang dibentuk di Melbourne pada 1995. Seperti halnya organisasi-organisasi diaspora yang terfokus pada pembebasan, mereka bubar setelah 1999.

‡ Surat kepada Xana Bernades, seorang perempuan muda Timor yang tinggal di Australia, menanggapi sepucuk surat dari dirinya bersama dana yang terkumpul dari pertandingan kriket dan festival solidaritas di Melbourne (Sarah Niner [Ed.], *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão*, Aurora Books, Victoria, 2000, hal. 170-171).

422. Xanana Gusmão mengulang pernyataan itu setelah pembebasannya. Ia mengatakan dalam suatu konferensi pers di Lisbon pada 2000, bahwa dunia mungkin tidak akan pernah tahu kebenarannya, bila bukan karena mereka yang melarikan diri dari Timor-Leste dan mendedikasikan sebagian besar hidup mereka untuk mewujudkan penentuan nasib sendiri. Dalam Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Komisaris Olandina Caeiro meminta Abel Guterres mengidentifikasi momen yang sangat istimewa dalam hidupnya, sejak ia meninggalkan Timor-Leste pada 1975. Abel menjawab:

Ada banyak momen yang berkesan, tapi ada satu yang paling menonjol. Tahun 1999 saya datang ke Lcidere, saya lihat bendera CNRT sedang dikibarkan. Lalu saya berpikir: 'Wow, ini luarbiasa'. Ini sesuatu yang dari dulu selalu saya impikan. Rasanya seperti di surga. Sulit menggambarkan perasaan saya waktu itu. Saya melihat semuanya menari tebe-tebe di sekitar bendera. Benar-benar sesuatu yang sangat luarbiasa.²³⁵

Kesimpulan

423. Perjuangan traumatis Timor-Leste selama 25 tahun demi penentuan nasib sendiri seharusnya tidak perlu terjadi. Seperti negara-pulau kecil lainnya di wilayah itu, hak Timor-Leste yang diakui secara internasional untuk membuat keputusan-keputusannya sendiri, seharusnya dihargai, dirayakan, dan difasilitasi secara damai, dan tidak ditindas dengan kekerasan.

424. Di antara berbagai macam faktor yang menentukan kemerdekaan Timor-Leste, yang paling penting ialah kontribusi dari gerakan Resistansi.

425. Untuk mencapai cita-citanya, Resistansi harus menghadapi sejumlah besar masalah rumit, yang bersifat eksternal, dan yang dibuatnya sendiri, termasuk perang saudara. Meskipun memiliki legitimasi yang jelas mengenai tujuannya, garis depan diplomatik terpaksa beroperasi dalam lingkungan yang bertentangan dengan ideologi dan tujuan-tujuannya, dan yang memihak kepada kekuatan pendudukan ketimbang kepada kuasa pemerintahan yang sah. Resistansi eksternal juga terpisah dan beroperasi dengan hanya separuh efektif. Fretilin harus memikul beban sendiri selama bertahun-tahun, sementara UDT membangun kembali organisasi serta kredibilitasnya setelah perang saudara dan kolaborasi tokoh-tokoh utamanya dengan Indonesia.

426. Resistansi menghadapi tantangan-tantangan ini dengan menggunakan kekuatannya dan dengan menyesuaikan diri tanpa mengorbankan cita-citanya atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Walaupun tidak berhasil menghentikan memburuknya nasib diplomatiknya, kebijakan awal Fretilin sangat penting dan memberi kontribusi yang signifikan dalam jangka panjang. Kebijakan-kebijakan itu meliputi keputusan membuka garis depan diplomatik, untuk memfokuskan pada PBB dan hak-hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri yang diakui secara internasional, untuk bekerja dengan Portugal, untuk membangun dukungan di Afrika dengan lima negara bekas

jajahan Portugis dan suara yang banyak di PBB, untuk membangun relasi dengan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga penting di negara-negara Barat, serta memilih José Ramos-Horta sebagai wakil Timor-Leste di PBB. Kontribusi Ramos-Horta dalam membangun dukungan masyarakat sipil dan kesadaran dunia mengenai Timor-Leste sangat luarbiasa, demikian pula masukannya kepada Resistansi tentang kebijakan dan strategi, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan diplomatiknya yang ekstensif, sangat penting baik di dalam maupun di luar negeri.

427. Kontribusi yang paling penting terhadap diplomasi Resistansi berasal dari dalam, ketika Resistansi dibentuk kembali sebagai pergerakan yang berdasarkan nasionalisme dan bukan afiliasi partai atau ideologi politik, serta berkomitmen pada demokrasi mendukung pluralisme dan hak asasi manusia. Perubahan kebijakan ini membantu memperbaiki nasib Timor-Leste, dan José Ramos-Horta diberi kepercayaan memimpin pelaksanaannya di luar negeri. Untuk menerapkannya ke dalam praktik tentu saja membutuhkan waktu, tetapi dampak diplomatik yang timbul sangat luarbiasa, karena berhasil menyangkal pernyataan bahwa Resistansi terbatas pada Fretilin dan hanya bersifat eksternal. Barisan-barisan Resistansi di dalam dan luar Timor-Leste meningkat, termasuk di kalangan diaspora. Mereka mengakomodasi sejumlah kebijakan UDT yang signifikan dan akhirnya berhasil meredam ketakutan bahwa Timor-Leste potensial menjadi “Kuba di Asia Tenggara”. Walaupun ditolak di beberapa bagian, Resistansi yang sebelumnya terpisah-pisah tumbuh menjadi suatu gerakan terpadu di bawah pimpinan Xanana Gusmão dan José Ramos-Horta.

428. Resistansi internal dan eksternal telah memetik ilmu dari pengalaman pahitnya, dan menciptakan dirinya kembali dalam kancah peperangan dan politik internasional. Hasilnya, dalam kerjasama dengan masyarakat sipil, adalah salah satu gerakan diplomasi rakyat yang paling berhasil selama abad ke-20.

Masyarakat sipil

Pendahuluan

429. Bagian ini berfokus pada kontribusi masyarakat internasional terhadap perjuangan rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri. Masyarakat sipil internasional menemani rakyat Timor-Leste dalam setiap langkah perjalanan panjang mereka menuju kemerdekaan, tetapi usaha-usahanya jarang diakui dalam catatan sumber-sumber resmi atau hanya disinggung secara umum.^{*} Bagian ini

^{*} Catatan resmi Pemerintah Australia tentang peran Australia di dalam menyelesaikan perdebatan Timor-Leste tidaklah memasukkan peran masyarakat sipil. Lihat *East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge*, Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra, 2001. Jamsheed Marker menyebut sepintas lalu tentang organisasi non-pemerintah dalam *East Timor: A Memoir of the Negotiations for Independence*, McFarland & Company, Inc., London, 2003. Dalam catatannya tentang Jajak Pendapat 1999, Ian Martin, kepala UNAMET, memberikan penghargaan besar terhadap organisasi-organisasi non-pemerintah, tetapi mengakui bahwa cerita versi mereka bukanlah pokok persoalan buku yang dia tulis (*Self-Determination in East Timor*, hal. 13).

ditujukan untuk mengakui solidaritas yang luarbiasa itu, dan untuk memberitahu rakyat Timor-Leste, yang mayoritas tidak meninggalkan tanah airnya selama perang dan terputus dari dunia luar, tentang aktivitas yang berlangsung di luar Timor-Leste guna membela hak asasi mereka atas penetapan nasib sendiri. Karena keterbatasan tempat, tidaklah mungkin menceritakan secara terperinci atau berlaku adil terhadap ribuan individu dan organisasi yang terlibat selama 25 tahun perjuangan (1974 - 1999). Setiap negara sebaiknya layak mendapat bagian tersendiri. Namun, bab ini hanya difokuskan pada tahun-tahun awal, ketika kegiatan penting yang dilakukan umumnya jarang diketahui hingga hari ini. Masyarakat sipil Indonesia layak dihargai secara khusus, karena keterlibatan mereka membutuhkan keberanian luarbiasa. Kontribusi masyarakat sipil internasional dalam bidang-bidang penting lainnya seperti bantuan, pengungsi, dan kebutuhan kemanusiaan tidak disertakan, meskipun diketahui bahwa layanan-layanan ini sering sangat penting untuk kelangsungan hidup dan tanpa mereka penentuan nasib sendiri mungkin akan menjadi tidak berarti bagi banyak warga Timor-Leste.

Terminologi

430. Komisi telah memilih menggunakan istilah 'masyarakat sipil' karena empat alasan. Pertama, sebagai satu sektor istilah ini membedakan dari sektor-sektor penting lainnya yang membentuk masyarakat demokrasi, yaitu pemerintah dan bisnis. Istilah ini mengakui timbulnya 'sektor ketiga' dan perannya yang independen dalam menanggulangi masalah-masalah dunia. Dalam konteks Timor-Leste hal ini sangat relevan, karena dalam sebagian besar periode 1974 - 1999, masyarakat sipil memainkan peran yang memiliki ciri khas tersendiri, dan dalam hal Timor-Leste biasanya berseberangan dengan pihak pemerintah dan bisnis.* Kedua, istilah ini lebih luas dibanding 'organisasi non-pemerintah' (ornop/NGO) dan 'grup solidaritas', yang sering digunakan dalam konteks ini, tapi tidak cukup luas untuk mencakup luas dan ragam individu, grup, dan organisasi yang memberi dukungan kepada Timor-Leste dalam penentuan nasib sendiri. Ketiga, istilah 'masyarakat sipil', bukan sekadar 'organisasi non-pemerintah' (NGO), tetapi memiliki isi positif dan mewakili komitmen untuk membangun masyarakat yang beradab berdasarkan nilai-nilai perdamaian, hak asasi manusia, dan demokrasi. Istilah ini pantas digunakan di sini karena masyarakat sipil internasional mendapat legitimasi dan kehormatan dalam pembelaannya terhadap Timor-Leste dengan mempromosikan nilai-nilai inti dan umumnya beroperasi tanpa kekerasan, di dalam batas-batas hukum dan melalui

.....
* Menurut kesaksian Luisa Teotonio Pereira kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Portugal adalah pengecualian untuk aturan umum ini, setidaknya di tahun-tahun sesudahnya. Konfrontasi yang mencirikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil di negara-negara lain baru berubah pada 1999, setelah Indonesia dan komunitas internasional menyetujui penyelenggaraan tindakan penentuan nasib sendiri di Timor-Leste. Sektor swasta atau bisnis pada umumnya tidak terlibat secara terbuka dengan kedua belah pihak, walaupun mendapat keuntungan dari hubungan komersilnya dengan Indonesia, yang tumbuh pesat di bawah pemerintahan Soeharto. Tidak ada pergerakan warga yang mendukung Timor-Leste di negara-negara seperti bekas Uni Soviet dan Cina karena keberadaan 'sektor ketiga' tidak dikenal dalam sistem sosialis.

jalur hukum.’ Terakhir, istilah masyarakat sipil direkomendasikan karena telah diadopsi secara resmi oleh PBB dan menandai pergeseran penting dalam pemikiran internasional. Telah tumbuh pengakuan di lingkungan pemerintah bahwa masyarakat sipil memiliki peran dalam pemerintahan global, dan bahwa pekerjaan PBB bukan lagi monopoli pemerintah.[†] Pengalaman Timor-Leste melahirkan kebijaksanaan untuk tidak menyerahkan segalanya kepada pemerintah. Seperti diakui Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan di Dili pada Mei 2002, kontribusi masyarakat sipil sangat penting dalam peran PBB untuk menyelesaikan konflik Timor-Leste.

Masyarakat sipil internasional

431. Peran masyarakat sipil internasional dalam mendukung hak-hak politik Timor-Leste dibagi dalam lima tahap dan, seperti riwayat Timor-Leste, diawali serta diakhiri pada tahap puncak; sedangkan di tengah perjalanannya penuh kegagalan dan keputusasaan.

Tahap pertama: Tantangan awal dan permulaan, 1974 - 1978

432. Meskipun secara prinsip dekolonisasi dimulai pada 1960,[‡] masyarakat sipil internasional tidak menunjukkan perhatian yang berarti hingga 1974, ketika mereka merespons pemberitaan media dan lobi-lobi para aktivis Timor-Leste dan para perwakilan Fretilin khususnya. Masyarakat sipil internasional layak dikritik karena tidak lebih cepat mengangkat masalah Timor-Leste menanggapi baik inisiatif PBB maupun situasi yang menyedihkan di Timor Portugis di bawah rezim Salazar-Caetano. Pada saat yang sama, dengan tanggapannya yang terlambat itu, masyarakat internasional tidak dapat dituduh telah merekayasa isu motif-motif politik tersembunyi, seperti yang sering ditudingkan. Kesadaran masyarakat internasional justru berkembang dan bertindak sebagai tanggapan atas inisiatif rakyat Timor-Leste, bukan sebaliknya.

433. Invasi Indonesia dikutuk oleh individu dan organisasi di sejumlah negara, termasuk Kanada, Jepang,[§] Selandia Baru, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Namun pada waktu itu pusat-pusat utama aktivitas masyarakat sipil internasional yang terorganisasi hanya ada di Portugal, Australia, dan Inggris.

.....
* Kasus kontroversial adalah dirusaknya pesawat jet tempur Hawk milik Inggris oleh empat orang aktivis perempuan pada Januari 1996. Setelah kejadian tersebut mereka dibebaskan oleh pengadilan. [Lihat segmen 6.2.4: Titik balik 1991-1998, paragraf 478 – 493, di bawah]

† Sementara PBB mendorong kemitraan, ia tetap menjadi forum bagi negara. PBB tidak berencana memberikan kursi atau suara pada organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam Sidang Umum.

‡ PBB pertama-tama mengakui status Timor-Leste sebagai koloni dengan hak kemerdekaan pada 1960.

§ Contoh protes adalah yang dilakukan di luar kantor pemerintah Indonesia di Tokyo dan Osaka. [Suster Monica Nakamura, Kesaksian dalam Audiensi Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.]

434. Masyarakat sipil Portugal menyambut baik Revolusi Anyelir 1974 dan keputusan Gerakan Angkatan Bersenjata (MFA, Movimento das Forças Armadas) untuk dekolonisasi, demokratisasi, dan mengembangkan masyarakat sipil Portugis dan provinsi-provinsinya di seberang lautan. Masyarakat sipil sendiri merupakan pewaris perubahan politik tersebut, setelah berpuluh-puluh tahun termarginalisasi di bawah pemerintahan diktatorial. Bagi banyak orang, demokrasi dan dekolonisasi saling berkaitan. “Sebuah negara tidak bisa bebas selama menindas negara-negara lain” adalah slogan umum sebelum dan sesudah 25 April. Masyarakat Portugal yang hidup dan bekerja di Timor-Leste dan mereka yang telah bekerja untuk mengakhiri kediktatoran dan kolonialisme Portugis, merasakan tanggungjawab kuat terhadap rakyat Timor-Leste. Centro de Informação e Documentação Anti-colonial (CIDAC, Pusat Informasi dan Dokumentasi Anti-Kolonial) didirikan pada September 1974 untuk menggalakkan dekolonisasi, termasuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Timor-Leste. CIDAC berkontribusi dalam pendirian Associação de Amizade Portugal-Timor-Leste (Badan Persaudaraan Portugal dan Timor-Leste) meski hanya sebentar; dan pada 1981, pada pendirian Comissão para os Direitos do Povo Maubere (CDPM, Komisi untuk Hak Rakyat Maubere) yang menjadi organisasi solidaritas utama Portugal sampai dibubarkan pada 2002.

435. Meskipun hubungan dengan Timor-Leste telah terjalin selama 400 tahun, dan dengan adanya bahasa yang sama serta adanya orang Timor-Leste di Portugal, selama periode awal ini dalam hubungan dengan masalah Timor-Leste, masyarakat sipil menghadapi banyak tantangan pada tingkat pemerintah dan masyarakat. Ini termasuk ketidaktahuan umum tentang Timor-Leste, kekacauan di Portugal yang menghasilkan perubahan politik yang radikal setelah 48 tahun menghadapi rezim kediktatoran, kesibukan dengan koloni-koloni Portugal di Afrika, perbedaan pendapat tentang masa depan Timor-Leste, serta perselisihan antara Fretilin dan UDT. Luisa Teotonio Pereira, koordinator CDPM selama 19 tahun, memberi kesaksian pada Komisi:

Ketidaktahuan tentang sejarah dan kebudayaan rakyat Timor, konteks geo-strategis wilayahnya, dan terpencilnya dari metropolis, dan juga kerahasiaan negosiasi antara Portugal dan Indonesia, menyebabkan diskusi tentang Timor berada di tataran yang rendah dan umumnya hanya menyinggung ideologi, dengan nilai praktis yang sangat sedikit. Warga Portugal yang tertarik dengan hak-hak rakyat Timor tidak mampu memaksa kekuatan politik saat itu untuk melakukan perubahan strategi mendasar yang selanjutnya dapat mengubah jalannya kejadian, seperti tindakan memperkuat keberadaan dan tindakan Portugis di Timor, serta menginternasionalisasi masalah tersebut.²³⁶

436. Sadar akan tanggungjawab mereka, khususnya karena memiliki bahasa yang sama dengan gerakan Resistansi Timor-Leste, grup-grup masyarakat sipil berusaha keras menyebarkan informasi berdasarkan sumber-sumber Timor dan lainnya, termasuk hasil kerja luarbiasa dari jurnalis-jurnalis Portugis yang berani seperti,

antara lain, Adelino Gomes. Namun, karena tantangan-tantangan tersebut di atas, masyarakat sipil Portugis membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum dapat memaksimalkan kontribusinya.

437. Australia merupakan pusat utama untuk dukungan masyarakat sipil internasional terhadap Timor-Leste selama periode tersebut. Sebagai tetangga demokratis terbesar Timor-Leste, sejak 1974 Australia dijadikan sasaran oleh partai-partai politik Timor-Leste, khususnya Fretilin, dengan tujuan mendapatkan dukungan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sipil untuk partai mereka dan program-programnya. Maka, pada saat invasi Indonesia terjadi, masalah Timor-Leste sudah tercantum dalam agenda sejumlah organisasi dan individu Australia, termasuk kaum akademisi, aktivis hak asasi manusia, jurnalis, politikus, lembaga bantuan, gereja, tentara veteran,^{*} mahasiswa, dan serikat dagang. Sejumlah besar dari mereka itu pernah berkunjung ke Timor-Leste.

438. Sejak saat itu, landasan bagi komitmen masyarakat sipil Australia yang beragam dan mantap telah diletakkan. Ini dapat dilihat dari survei singkat atas asosiasi-asosiasi pertama mereka, yang banyak di antaranya telah memberi kontribusi terhadap pengembangan dukungan jangka panjang regional dan internasional bagi Timor-Leste.

439. Beberapa anggota parlemen Australia mengunjungi Timor-Leste, dua kali pada 1975, dan membentuk kelompok dukungan Timor-Leste yang kecil tapi kuat di Canberra, menentang kebijakan anti-kemerdekaan-Timor dari pemerintah saat itu dan seterusnya. Salah satu anggota parlemen dari Partai Buruh, Ken Fry, memberi kesaksian pada Dewan Keamanan PBB pada April 1976 dan menjadi pendukung utama Timor-Leste di Parlemen Nasional. Rekannya, Gordon McIntosh, juga aktif dalam Senat Australia dan berperan sangat penting dalam menggerakkan masyarakat sipil Selandia Baru. Penyelenggaraan Sidang Kongres AS tentang Timor-Leste pada 1977 didorong oleh para anggota parlemen Australia yang dipimpin oleh Tom Uren, salah seorang veteran yang bertugas di Timor Barat pada Perang Dunia Kedua.

440. Lembaga-lembaga bantuan Australia mengirim bantuan kemanusiaan sebagai reaksi atas perang saudara yang pecah 1975. Di antaranya termasuk Australian Council for Overseas Aid (ACFOA, Dewan Australia untuk Bantuan Luar-Negeri), sebuah asosiasi yang merangkul sekitar 70 organisasi nonpemerintah nasional. Selama 24 tahun berikutnya, lembaga tersebut secara terbuka mengadvokasi—baik di negara sendiri maupun di luar negeri—penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste. Fr. Mark Raper, SJ, salah seorang anggota delegasi ACFOA, menggalang dukungan untuk Timor-Leste di jaringan-jaringan keadilan sosial di Australia dan Asia. Dengan demikian ia memperkuat dukungan atas penentuan nasib

.....
^{*} Beberapa veteran perang Australia yang bertempur melawan Jepang di Timor-Leste dengan pertolongan dan perlindungan dari masyarakat Timor-Leste di dalam Perang Dunia Kedua, memiliki kepercayaan kuat bahwa Australia berutang secara moral kepada masyarakat Timor-Leste atas pengorbanan yang mereka lakukan untuk Australia. Mantan prajurit penyerang Cliff Moris dan Paddy Kenneally berada di antara mereka yang secara terbuka mengemukakan cara pandang ini; tapi, khawatir akan penyebaran ajaran komunisme, tidak semua rekan mereka bisa setuju dengan mereka.

sendiri yang dianjurkan Komisi Katolik untuk Keadilan dan Perdamaian (Catholic Commission for Justice and Peace). Lembaga-lembaga bantuan Australia, termasuk Australian Catholic Relief (Bantuan Katolik Australia) dan Community Aid Abroad (Bantuan Komunitas Luar Negeri), mendanai kunjungan James Dunn ke Portugal pada Januari 1977, dan di sana ia mewawancarai para pengungsi yang meninggalkan Timor-Leste setelah Agustus 1976. Lapornya sangat penting dalam mengonfirmasi telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Indonesia sebagaimana diklaim oleh Fretilin.

441. Australia merupakan negara tujuan utama bagi para pengungsi perang saudara Timor-Leste—suatu perkembangan yang berhasil memperkuat kampanye untuk Timor-Leste di Australia dan di wilayah sekitarnya. Lima orang pengamat Deklarasi Kemerdekaan Fretilin pada November 1975 semuanya warga Australia: jurnalis Michael Richardson, Jill Jolliffe, dan Roger East; David Scott, Ketua Community Aid Abroad; dan Sam Kruger, seorang bekas tentara. Jill Jolliffe menjadi salah seorang sumber yang paling mengerti tentang Timor-Leste, dan laporan-laporannya muncul di media internasional selama penjajahan. Tiga dari enam orang jurnalis yang berpangkalan di Australia dan terbunuh di Timor-Leste sebelum akhir 1975 adalah warga Australia. Nasib mereka menarik perhatian masyarakat luas di seluruh Australia. Istri salah seorang jurnalis itu, Shirley Shackleton, dan saudara laki-laki seorang jurnalis lainnya, Paul Stewart, menggunakan media dengan pandai dan menjadi simbol perjuangan Timor-Leste di Australia. Isu Timor mendapatkan dukungan di kalangan serikat buruh, dan menghasilkan pelarangan untuk barang-barang yang akan dikirim ke Indonesia, serta kunjungan ke Jakarta pada April 1976 oleh Presiden Dewan Serikat Buruh Australia (Australian Council of Trade Unions, ACTU), Bob Hawke, serta rekannya aktivis Timor yang berdedikasi, Jim Roulston, untuk mendorong dilakukannya penyelidikan tuntas terhadap tewasnya jurnalis-jurnalis di Balibó. Kelompok solidaritas Australia yang paling lama bekerja, yaitu Campaign for an Independent East Timor (CIET, Kampanye untuk Timor-Leste Merdeka) dan Australia - East Timor Association (AETA, Perhimpunan Australia - Timor-Leste), didirikan setelah para pendirinya mengunjungi Timor-Leste. CIET didirikan di Sydney pada November 1974 oleh Denis Freney (1936-1995), yang mempunyai jaringan di Inggris, di beberapa kota Australia (Adelaide, Canberra, Darwin, Newcastle, Wollongong), dan kemudian juga di Selandia Baru. AETA, melalui David Scott, membantu pembentukan misi pertama Fretilin di PBB pada Desember 1975. Setelah invasi Indonesia, CIET menjadi saluran informasi utama tentang penjajahan dan resistansi, melalui hubungan radio Fretilin yang berbasis di Darwin* dan East Timor News Agency (Biro Berita Timor-Leste). CIET juga

* Radio Maubere adalah satu-satunya alat bagi Resistansi dalam berhubungan dengan dunia luar setelah militer Indonesia menutup wilayah tersebut. Siaran Fretilin tentang perang di Timor-Leste ditangkap di Darwin dan disebarkan oleh CIET ke perwakilan-perwakilan Fretilin di luar negeri, PBB, grup-grup dukungan, media, dan pemerintah. Transmisi dari Darwin dilakukan dengan keterampilan dan kegigihan anggota-anggota Fretilin Tony Belo dan Estanislaú da Silva dan warga Australia pendukung mereka, dipimpin oleh Brian Manning, meskipun secara periodik peralatan mereka disita oleh otoritas Australia. Komunikasi rahasia Fretilin harus dipecahkan sebelum disebarkan. Jaringan ini ditutup pada November 1978 setelah militer Indonesia mengambil radio Fretilin dari tangan Alarico Fernandes di Timor-Leste.

tanggung jawab dalam membuat *The Isle of Fear, Isle of Hope*, film berbahasa Inggris pertama tentang perjuangan Timor-Leste, yang dibuat pada 1975. Komisi mendengar kesaksian David Scott tentang usaha-usaha nekat untuk membatalkan embargo terhadap Timor-Leste pada 1976, termasuk usaha yang gagal untuk mendaratkan kapal dari Darwin oleh beberapa orang Australia.^{*}

442. Aktivitas masyarakat sipil di Inggris lebih kecil daripada yang di Portugal atau di Australia. Dibandingkan Australia dan Portugal, Inggris hampir tidak memiliki relasi dengan Timor-Leste. Hal ini disebabkan karena wilayahnya yang terpencil dan tidak adanya komunitas Timor-Leste di Inggris yang mengikuti kejadian-kejadian di tanahair mereka. Di samping itu, meskipun ada dua warga Inggris yang termasuk dalam lima jurnalis yang berbasis di Australia yang terbunuh di Balibó pada Oktober 1975, pemerintah Inggris mengambil kebijakan yang bersifat menjauhkan diri dari masalah Timor-Leste, guna mengurangi kemungkinan terjadinya tekanan publik untuk mengecam Indonesia. Berdasarkan hubungannya dengan Portugal yang sudah sejak dulu, Inggris mengambil sikap “*low profile*” terhadap masalah Timor-Leste selama tahun-tahun akhir pemerintahan Portugal di sana. (Lihat segmen 3.5 dalam bab ini tentang pemerintah Inggris, paragraf 221 - 244.)

443. Meskipun menghadapi lingkungan yang tidak menunjang, dua organisasi masyarakat sipil Inggris bersikeras mengangkat masalah tersebut. Hasil kerja mereka, dan kemudian keterlibatan lembaga Gereja, akhirnya menjadikan Inggris pusat penting untuk dukungan internasional pada Timor-Leste. Pelopornya adalah British Campaign for an Independent East Timor (BCIET, Kampanye Inggris untuk Timor-Leste Merdeka) dan “Tapol”, Kampanye Inggris untuk Pembebasan Tahanan Politik Indonesia.[†] BCIET dibentuk pada 1974 sebagai bagian dari jaringan CIET yang dipimpin Denis Freney dan menjadi ujung tombak gerakan solidaritas di Inggris sampai 1979. Salah satu peran utamanya adalah menyebarkan informasi yang diterima dari Fretilin ke seluruh Inggris melalui Denis Freney. John Taylor dan Dave Macey adalah dua anggota penting yang bekerjasama erat dengan “Tapol” dan membangun hubungan yang erat dengan kalangan gereja, akademisi, dan politik. John Taylor kemudian menulis dua buku tentang Timor-Leste dan menyumbangkan tulisan pada beberapa buku lainnya.

444. “Tapol” dibentuk pada Juni 1973 dan menerbitkan laporan-laporan reguler tentang Timor-Leste sejak 1974. Setelah BCIET bubar, “Tapol” membantu terus

Sambungan ini dibangun kembali pada 1985 untuk periode yang singkat. Catatan Brian Manning tentang aktivitas ini dapat ditemukan dalam *A Few Rough Reds*, ed. Hal Alexander dan Phil Griffiths, Australian Society for the Study of Labour History, Canberra, 2003. Catatan Rob Wesley-Smith dapat ditemukan dalam *Free East Timor*, ed. Jim Aubrey, Random House Australia, Milsons Point, NSW, 1998.

* Pemerintah Australia menyita kapal dan mendakwa kru tersebut dengan dakwaan pelanggaran hukum bea cukai. Pengadilannya berlangsung selama 12 hari. (David Scott, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004)

† Sebagai reaksi atas Timor-Leste dan situasi yang sedang berubah di Indonesia, Tapol memperluas namanya menjadi British Campaign for the Defence of Political Prisoners and Human Rights in Indonesia dan, sejak 1986, menjadi Indonesia Human Rights Campaign.

menghidupkan isu Timor-Leste di Inggris, sampai sejumlah organisasi gereja ikut mengobarkan kampanye dan British Coalition for East Timor (Koalisi Inggris untuk Timor-Leste) dibentuk pada awal 1980-an. Umumnya, “Tapol” berkampanye melalui publikasi laporan berkala, yang keteraturan, kelangsungan, dan profesionalismenya sangat dikagumi oleh aktivis lain. Kontribusinya yang utama berupa laporan-laporan yang berdasarkan pada sumber-sumber dari dalam Indonesia. “Tapol” dan laporan berkalanya sangat berutang budi pada inisiatif dan dedikasi Carmel Budiardjo—ia sendiri bekas tahanan politik di Indonesia—dan Liem Soei Liong, orang Indonesia yang hidup terkucil di Belanda. Mereka menjalin jaringan internasional yang luas melalui laporan berkala mereka dan berbicara kepada umum di luar negeri, termasuk kemudian di PBB. Mereka juga membangun jaringan dukungan yang kukuh di Inggris, yang terdiri atas para pelindung terpandang, termasuk orang-orang terkemuka seperti Lord Avebury, seorang advokat yang persuasif bagi banyak kalangan elite di sepanjang perjuangan Timor-Leste di Inggris.

445. Masyarakat sipil menerapkan dua pendekatan yang sangat berbeda mengenai isu Timor-Leste selama periode ini. Sebagian besar dari pihak pertama terdiri atas grup-grup solidaritas yang berkampanye mendukung kemerdekaan Timor-Leste dan Fretilin. Grup solidaritas pertama yang dibentuk bernama Campaign for an Independent East Timor (CIET). Kelompok ini mengakui bahwa Timor-Leste telah menentukan status politiknya serta menerima realitas kekuasaan Fretilin. Mereka dengan bersemangat menyetujui program-program reformasi Fretilin, yang cocok dengan perkembangan progresif dan agenda-agenda politik, serta menolak anggapan bahwa Timor-Leste akan lebih baik di bawah kekuasaan rezim Soeharto. Pendirian ini terus berjalan selama tahun-tahun awal penjajahan, ketika Fretilin menguasai wilayah dan kontak radio dengan dunia luar, dan diperluas dengan menyertakan dukungan terhadap penentuan nasib sendiri ketika Fretilin melakukan perubahan strategi. Gerakan solidaritas ini bahkan tidak surut dengan terjadinya, atau diduga terjadinya, pelanggaran hak asasi manusia oleh Fretilin. Sebagian besar masyarakat waktu itu tidak tahu tentang masalah pelanggaran hak asasi manusia tersebut, atau percaya bahwa klaim-klaim, baik yang berasal dari pihak Indonesia maupun dari pihak pendukung Timor-Leste, dibesar-besarkan atau didasari motif politik.

446. Pihak lain dalam masyarakat internasional cenderung menempuh pendekatan yang lebih didasarkan pada prinsip hak asasi manusia untuk menentukan nasib sendiri, ketimbang pada politik kepartaian. Dari pandangan kebijakan politik paling tidak pihak ini bersikap terbuka mengenai integrasi masa depan Timor-Leste dengan Indonesia, jika hal ini merupakan hasil dari proses yang adil, di samping itu juga bersikap menjaga jarak dengan Fretilin dan gerakan solidaritas. Sebagian besar pihak ini terdiri atas beberapa organisasi nonpemerintah, gereja, dan beberapa organisasi hak asasi manusia

.....
* Contoh-contoh para kaum akademis yang mempromosikan Fretilin dan kebijakan-kebijakannya dalam hubungannya dengan pendidikan, ekonomi, dan reformasi lainnya adalah António Barbedo de Magalhaes, Helen Hill, dan John Taylor. Helen Hill, yang mengunjungi Timor-Leste sebelum diambil-alih Indonesia, menulis tesis doktoralnya tentang Fretilin, yang hingga saat ini menjadi satu-satunya studi tentang partai tersebut. Kontribusinya yang lain termasuk *Timor Story*, diterbitkan pada 1976 oleh Timor Information Service. .

yang bekerja atas dasar kebijakan yang telah ditetapkan secara jelas. Mereka kurang fleksibel dibanding grup-grup solidaritas, tetapi sering lebih pandai dalam mengatur siasat kebijakan tentang isu Timor-Leste, khususnya dalam periode ketika Perang Dingin sedang memuncak. Kemandiriannya juga mencegah mereka terlibat dalam perang ideologi dan masalah organisasi, seperti yang terjadi pada beberapa bagian dalam gerakan solidaritas pada tahun-tahun awal. Namun meskipun mandiri, mereka tidak bertentangan dengan Fretilin atau pihak-pihak yang solider dengan Fretilin, dan sering bekerjasama serta bahkan mencari informasi dari mereka.

447. Contoh untuk pendekatan ini adalah mantan konsul Australia untuk Timor-Leste, James Dunn, yang pandangannya tentang masalah Timor-Leste berpengaruh kuat pada persepsi publik dari berbagai kalangan. Ia mewakili banyak pihak ketika menulis hal-hal berikut di bawah ini kepada José Ramos-Horta (Fretilin) dan Domingos de Oliveira (UDT), pada 18 September 1974:

Saya menulis catatan pendek untuk Anda—dan juga untuk Domingos Oliveira—dengan maksud menjauhkan diri dari laporan-laporan yang mengatakan bahwa Australia mendukung integrasi Timor ke dalam Indonesia. Saya tidak ingin berkomentar tentang laporan itu, atau tentang kebijakan apapun dari pemerintah Australia mengenai hal ini. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa, menurut saya, rakyat Timorlah yang harus memutuskan masa depan negara mereka, tanpa tekanan dari pihak luar. Dalam isu mengenai integrasi dengan Indonesia, saya hanya dapat mengatakan bahwa pada waktu saya berkunjung, saya merasa sangat sedikit rakyat Anda yang memilih garis kebijakan ini sebagai solusi atas nasib mereka. Jika situasi ini berubah, dan rakyat Timor memilih bergabung dengan Indonesia, tentu saja saya akan menerima keputusan tersebut. Begitu pula jika rakyat Timor memutuskan lebih memilih kemerdekaan, keputusan tersebut sepenuhnya akan saya terima secara pribadi, dan saya ingin membantu bangkitnya negara baru tersebut dengan cara apapun. Saya juga akan menghormati keputusan rakyat Anda untuk melanjutkan hubungan dengan Portugal, jika itu yang diinginkan. Tantangan ada pada Anda: Australia tidak bisa memaksa Anda ke arah manapun melawan keinginan Anda.*

448. Pendekatan yang berhasil menarik publik yang lebih luas ini diterapkan dengan hasil yang cukup baik oleh Action for World Development (AWD, Gerakan untuk Pembangunan Dunia), yang dipimpin Bill Armstrong. Sebagai gerakan gereja-gereja ekumenis di Australia, AWD menggunakan koneksinya dengan lembaga bantuan,

* Salinan dari surat dalam arsip CAVR. James Dunn adalah Konsul Australia untuk Timor Portugis 1962-1964. Ia mengunjungi wilayah tersebut mewakili pemerintah Australia pada 17-27 Juni 1974 dan mewakili ACFOA setelah perang saudara. Ia seorang pembela Timor-Leste yang tak mengenal lelah dan sangat kredibel selama penjajahan, serta penulis *East Timor: A Rough Passage to Independence*, Longueville Books, 2003. Pada 2001 ia dianugerahi Order of Australia, dan pada 2002 dijadikan Grande Oficial of the Order of Prince Henry oleh Jorge Sampaio, Presiden Portugal.

para aktivis keadilan sosial, dan gereja-gereja di Australia dan luar negeri, termasuk World Council of Churches (Dewan Gereja Sedunia), untuk menggalakkan masalah Timor-Leste menjadi masalah hak asasi manusia, bukan sekadar masalah pro-Fretilin atau anti-Indonesia.

449. AWD mendukung publikasi *Timor Information Service* (TIS) yang diedit oleh John Waddingham, salah seorang aktivis Australia untuk Timor-Leste yang memiliki pengetahuan sangat luas mengenai isu tersebut. Ia menyediakan informasi dan analisis yang andal, berdasarkan pada beberapa sumber dan bukan hanya sumber Fretilin. Pendekatan ini menarik garis tajam antara militer Indonesia dan rakyat Indonesia, yang situasinya juga perlu diketahui lebih baik, sehingga memungkinkan untuk membangun hubungan dengan masyarakat sipil Indonesia, sebagaimana kemudian memang telah terjadi. Hal ini juga perlahan-lahan membuka kemungkinan dibangunnya hubungan dengan diaspora Timor-Leste di Makau, Portugal, dan Australia, termasuk dengan anggota-anggota senior UDT,^{*} yang meninggalkan Timor-Leste sebagai pengungsi setelah kemenangan Fretilin dalam perang saudara. Mereka masih marah dan memiliki salah pengertian terhadap mereka yang dianggap pro-Fretilin.

450. AWD juga mendukung Pat Walsh yang bekerja untuk Timor-Leste dengan John Waddingham, sebelum bergabung dengan ACFOA dan bertugas sebagai peneliti utama dan advokat hak asasi manusia hingga 2000. Pekerjaan ini beragam dan mencakup penggalakan masalah hak asasi manusia di Indonesia dan masalah hubungan Australia-Indonesia. Dalam kaitannya dengan Timor-Leste, pekerjaan tersebut difokuskan pada penentuan nasib sendiri tetapi juga termasuk usaha menangani para pengungsi, bantuan kemanusiaan, hak asasi manusia, dan melibatkan jaringan ekstensif serta lobi di Australia dan internasional.

451. Namun variasi dalam pendekatannya tidak menghasilkan dampak pada pemerintah Indonesia dan sekutunya. Banyak pihak di kalangan pemerintah, media, bisnis,[†] dan masyarakat sipil, tak mengacuhkan pihak-pihak yang vokal membela Timor-Leste dan menganggap mereka sebagai pro-Fretilin dan anti-Indonesia, terlepas dari kecenderungan politik mereka. Dukungan utama untuk Fretilin dari Communist Party of Australia (Partai Komunis Australia) memperkuat pandangan yang dipropagandakan oleh Indonesia serta oleh beberapa pihak dalam hierarki Gereja Katolik Timor-Leste bahwa Fretilin adalah pengikut

.....
^{*} Beberapa pejabat Australia melaporkan pernyataan Jenderal Benny Moerdani pada 1 Desember 1975 bahwa "UDT memusuhi beberapa warga Australia, khususnya ACFOA dan perwakilan media tertentu dan juga Palang Merah. Orang asing siapapun yang ada di Dili berisiko dituduh oleh UDT sebagai simpatisan Fretilin". Dokument 354, Canberra, 2 Desember 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, p. 593, n.4

[†] *Australia-Indonesia Business Co-operation Committee* (AIBCC) menekan pemerintah Australia kurang dari 12 bulan setelah invasi untuk memberikan pengakuan penuh atas kedaulatan Indonesia di Timor-Leste demi kepentingan keamanan regional. Komite tersebut, yang mewakili 153 perusahaan besar, termasuk ANZ Bank, the Bank of NSW, Blue Metal Industries, the Australian Wheat and Dairy Boards, serta perusahaan gula utama, CSR, berargumentasi bahwa oposisi berlanjut atas penggabungan Timor-Leste dengan Indonesia bisa merusak hubungan dengan Indonesia. "Recognize Takeover: Companies in Approach to Canberra.", *The Age*, 23 Oktober 1976.

paham komunis.* Isu ini, ditambah perdebatan tentang Timor-Leste yang tidak layak hidup sebagai negara yang merdeka dan pentingnya hubungan baik dengan Indonesia, memecah pendapat publik dan menghalangi perjuangan Timor selama beberapa tahun. Pemerintah dan pihak-pihak yang mendukungnya, atau mereka yang diam saja, dituduh ikut berdosa. Masyarakat sipil, menurut kata-kata David Scott, “dipandang rendah sebagai ‘pencari perhatian’, ‘do-gooder’, ‘komunis’, ‘fellow traveller’, ‘bleeding heart’, ‘pinkos’ ‘tidak loyal pada Australia’ dan, yang terkejut dari semua itu, ‘naif’”²³⁷

Tahap kedua: Krisis dan awal baru 1978 - 1983

452. Periode ini merupakan masa yang paling sulit dan menantang bagi rakyat Timor-Leste serta para pendukung internasionalnya. Pada 1978, terjadi krisis yang mendalam. Pada akhir tahun ini, Indonesia mencapai kemajuan yang penting di bidang militer. Tentara Fretilin hampir dibinasakan dan Fretilin telah kehilangan pemimpinnya yang dipuja-puja, Nicolau Lobato, dan hubungan radio dengan dunia luar pun telah berhenti. Puluhan ribu warga Timor-Leste meninggal karena kelaparan atau menyerah, setelah dipaksa turun dari pergunungan dan keluar dari wilayah Fretilin melalui serangan militer yang gencar serta bencana kelaparan. Pada 1983, Dom Martinho da Costa Lopes, pemimpin Gereja Katolik dan pembela rakyat Timor-Leste yang terkemuka, dipaksa mundur dan meninggalkan Timor-Leste. Situasi diplomatis Timor-Leste juga berjalan buruk selama periode ini. Sayap eksternal Fretilin diguncang perpecahan internal yang serius dan nasib Timor-Leste di PBB semakin parah. Pada 1982, Timor-Leste mengalami “pukulan yang menghancurkan”, menurut kata-kata José Ramos-Horta, ketika sebuah Resolusi PBB yang lemah pun hanya mendapat empat suara. Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Indonesia, dengan girang mengatakan bahwa hasil ini “sangat memuaskan” dan bahwa Indonesia berharap PBB bisa menghapus isu Timor-Leste di tahun berikutnya, untuk selamanya.

453. Perkembangan kritis ini berdampak besar pada semangat dan momentum dukungan masyarakat sipil untuk Timor-Leste. Dihentikannya transmisi radio Fretilin dan larangan Indonesia terhadap akses independen ke wilayah Timor-Leste sangat menyulitkan usaha mempertahankan perhatian publik dan media pada isu tersebut, dan adanya rasa kegagalan menurunkan semangat perjuangan untuk Timor-Leste. Pemerintah beberapa negara berusaha memperlemah komitmen masyarakat sipil dengan berulang-ulang menyatakan bahwa dukungan masyarakat sipil tersebut “percuma” dan bahwa solusi tentang masalah Timor-Leste sudah “tidak dapat diubah.”†

* Di Australia, Bob Santamaria, pemimpin National Civic Council, yang sangat anti-komunis, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang Fretilin dan mereka yang ia tuntutan (meskipun sering salah) sebagai ‘pengikut komunis’. Pendapatnya sangat berpengaruh di kalangan konservatif dan kalangan Gereja, dan merugikan Timor-Leste.

† Menteri Luar Negeri Selandia Baru B.E. Talboys memberi contoh tipikal. Dalam sebuah memo kepada Kabinet setelah kunjungan Dubes Roger Peren dan Atase Pertahanan Kolonel Macfarlane ke Timor-Leste pada 1978, ia menulis: “Kesimpulan utama mereka adalah bahwa integrasi Timor Timur dengan Indonesia tidak dapat diubah kembali. Ini sesuai dengan pendapat pribadi saya tentang ini. Sementara pemerintah berkeberatan dengan tindakan-tindakan Indonesia di Timor, saya sendiri percaya bahwa tidak ada yang bisa dicapai, paling tidak bagi rakyat Timor, dengan terus mempermasalahkan masa

Banyak pihak juga berpendapat bahwa melanjutkan dukungan untuk masalah tersebut tidak tanggung jawab karena hanya akan mendorong perlawanan dan menghasilkan lebih banyak lagi kematian serta penindasan di Timor-Leste.

454. Meski diperlemah, khususnya dalam kapasitasnya untuk memobilisasi opini publik, masyarakat sipil tetap mempertahankan komitmennya. Telah diputuskan bahwa, bahkan jika tidak ada lagi yang mungkin dilakukan, isu tersebut harus tetap dihidupkan. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa perjuangan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip moral dan hukum, dan bahwa perdamaian yang langgeng di Timor-Leste hanya dapat dijamin melalui proses penentuan nasib sendiri yang sejati.[†] Sikap rakyat Timor-Leste juga menjadi faktor yang menentukan. Luisa Teotonio Pereira mengatakan pada Komisi:

Kapanpun pihak yang skeptis [di Portugal], khususnya di kalangan pemerintah, berusaha membenarkan “tindakan-tindakan realistik”, untuk “mengakhiri penderitaan rakyat Timor”, mereka selalu menjawab: “Selama rakyat Timor-Leste terus berjuang, apakah masuk akal jika kami menyerah pada ancaman dan tekanan?”²³⁸

455. Usaha solidaritas terus berlanjut. Di Selandia Baru pada 1978, CIET melancarkan kampanye besar-besaran berjudul “Biarkan Horta Bicara” dan memaksa pemerintah Selandia Baru membatalkan penolakan pemberian visa kepadanya.[†] Di Belanda pada 1980, masyarakat sipil bekerjasama dengan Fretilin untuk menuntut pemerintah Belanda ke pengadilan karena mengeksport peralatan militer (korvet) ke Indonesia. Pengadilan memutuskan memenangkan pemerintah, dengan dasar bahwa Republik Demokratik Timor-Leste dan Fretilin tidak memiliki status hukum. Grup-grup lain di Eropa dan Skandinavia berusaha memublikasikan keadaan buruk Timor-Leste dan memprotes pemerintah karena tidak mengambil tindakan. Ini termasuk aktivitas Michel Robert melalui Association de Solidarite avec Timor-Oriental (Perhimpunan Solidaritas dengan Timor-Leste) di Prancis; kerja Torben Retboll di Denmark, termasuk melalui International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA, Kelompok Kerja Internasional tentang Masalah Pribumi); dan hasil kerja Klemens Ludwig atas nama Society for Threatened Peoples in Germany (Perserikatan untuk Bangsa-Bangsa yang Terancam di Jerman). Pada 1985, para aktivis Jerman berhasil membujuk lebih daripada 100 anggota parlemen untuk menekan Menteri Pertahanan Jerman agar mengangkat masalah Timor-Leste kepada Presiden Soeharto saat kunjungannya ke Jakarta. Ia menolak. Seperti Belanda, Swedia,

lalu.” (“Memorandum for Cabinet”, Office of the Minister of Foreign Affairs, Wellington, 8 February 1978, dalam NZ...OIA Material, Volume 1).

* Sebagai contoh, ACFOA mengakui dalam Catatan Perkembangannya, Juli 1980, bahwa Timor-Leste “jarang sekali disebut dalam media Australia” tapi “hak rakyat Timor-Leste akan penentuan nasib sendiri harus tetap menjadi tujuan dasar...”

† Ramos-Horta tidak jadi berangkat karena krisis Fretilin di Maputo. Aktivis utama Selandia Baru pada periode tersebut adalah Colin Isles, Harry Bruhns, dan John Compton.

Prancis, dan Inggris, Jerman juga tetap menjual senjata ke Indonesia. Tapi, terdapat kemajuan di Parlemen Eropa, yang menghasilkan sejumlah resolusi tentang Timor-Leste dan pada 1994 mengimbau diakuinya hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, serta penghentian semua bantuan militer dan penjualan senjata ke Indonesia.

456. Pada 1981, grup solidaritas Asia pertama untuk Timor-Leste dimulai di Jepang oleh para kelompok perempuan di Hiroshima, dipimpin oleh Jean Inglis. Grup ini menerbitkan laporan berkala berbahasa Jepang, berjudul *Higashi Chimoru Tsuchin* (Berkala Timor-Leste), yang mencurahkan perhatiannya terhadap usaha penentuan nasib sendiri untuk Timor-Leste. Di Amerika Serikat, Arnold Kohen yang memulai keterlibatannya dalam masalah Timor-Leste setelah mendengar José Ramos-Horta berbicara pada 1975, memfokuskan usahanya pada pihak-pihak terkemuka di tiga institusi penting, kebanyakan di Washington: Kongres, media, dan Gereja Katolik. Ia bekerjasama dengan para anggota Kongres yang bersimpati dan para asistennya untuk mengadakan audiensi kongres yang baru, yang kali ini berfokus pada tanggapan Amerika terhadap kelaparan yang melanda Timor Timur pada 1978 - 1979.²³⁹ Ia dan Fr Reinaldo Cardoso, dengan bantuan Noam Chomsky, berhasil membujuk *New York Times* untuk menerbitkan editorial yang sangat kritis terhadap pemerintahan Carter. Pada 1980, *New York Times* mengimbau Amerika Serikat untuk mendukung penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor-Leste dan terus melakukannya. Noam Chomsky memberi kesaksian mendukung Timor-Leste pada Komite Dekolonisasi PBB pada 1978. Ia menulis panjang-lebar tentang Timor-Leste, khususnya mengkritik pers Amerika Serikat karena kurang memperhatikan masalah ini. Arnold Kohen memberitahu Komisi:

Kata-kata Chomsky tentang masalah ini memiliki pengaruh nyata, terkadang tidak langsung; dan sejarah harus mencatatnya karena kata-katanya sangat penting dalam membantu mengubah ketidaktahuan yang luas yang dulu ada di Amerika Serikat dan negara-negara lain tentang Timor-Leste.²³⁹

457. Arnold Kohen juga mengakui kontribusi mending Edward Doherty pada “waktu yang gelap ini”, kontribusi seorang penasihat kebijakan luar negeri untuk Uskup Amerika, David Hinkley, juga dari Ketua Seksi Amerika untuk Amnesty International, dan Michael Chamberlain, salah seorang dari sedikit aktivis akarrumput pada waktu itu dan pendiri East Timor Human Rights Committee yang bekerja selama 1979 - 1984.

458. Di Australia, kelompok-kelompok masyarakat sipil memprakarsai penyelidikan publik oleh Parlemen Australia pada 1982 - 1983. Proses tersebut mengumpulkan wakil-wakil komunitas Timor-Leste, Gereja, Amnesty International, beberapa lembaga bantuan, universitas, dan grup solidaritas dari tujuh kota. Carmel Budiardjo,

.....
* Dalam kesaksiannya kepada Komisi, mantan pejabat PBB, Francesc Vendrell, memberi penghargaan pada sukses luarbiasa Arnold Kohen dalam mendapatkan dukungan Kongres Amerika Serikat untuk Timor-Leste, yang berlanjut hingga 1999. Kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Dili, 15-17 Maret 2004

sekretaris “Tapol” di London, dan Profesor Roger Clark dari Rutgers University di Amerika Serikat, juga memberi kesaksian. Penyelidikan ini memaksa pemerintah mengirim delegasi Parlemen Australia ke Timor-Leste dalam usaha membatalkan bukti dari para saksi.’

459. Pada waktu itu sahabat-sahabat Timor-Leste juga menghasilkan beberapa publikasi. Pekerjaan rintisan Jill Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism*, diterbitkan pada 1978, dan selama beberapa tahun menjadi referensi utama berbahasa Inggris tentang Timor-Leste. Bekerja dari Portugal, ia juga menerbitkan *Timor Newsletter* selama 1980 - 1983. Pada 1979, “Tapol” mengisi kekosongan di Inggris dan Amerika Serikat dengan menerbitkan *An Act of Genocide: Indonesia's Invasion of East Timor*, oleh Arnold Kohen dan John Taylor. Pada 1980, *Yale Journal of World Public Order* menerbitkan monograf penting Profesor Roger Clark berjudul *The 'decolonisation' of East Timor and the United Nations norms of self-determination and aggression*. Lahir di Selandia Baru, Clark seorang profesor hukum terkemuka di Rutgers University di Amerika Serikat. Penghancuran ilmiahnya atas klaim-klaim Indonesia, yang mengatakan klaim-klaim itu sudah sejalan dengan hukum internasional, merupakan sumbangan pertama dari seorang pakar di bidang ini. Clark juga memberi kesaksian di PBB dan lembaga-lembaga lain tentang Timor-Leste. Pada 1981, *Det Glomda Kriget* (Perang yang Terlupakan) diterbitkan di Stockholm oleh Ollie Tornquist dan H. Amahorseja dari ‘Osttimor Kommitten’ di Swedia

460. Periode krisis ini memaksa masyarakat sipil untuk lebih kreatif dan membagi-bagi fokus dan jaringannya agar dapat terus menghidupkan masalah ini. Mereka berpendapat bahwa protes dan fokus pada isu penentuan nasib sendiri saja tidak cukup. Khususnya sebagai tanggapan atas bencana kelaparan yang mengejutkan pada 1978 - 1979, warga dan organisasi yang merasa prihatin atas nasib Timor-Leste didorong untuk menjalin hubungan dengan Timor-Leste dengan cara-cara baru, misalnya melalui isu-isu seperti hak asasi manusia, penyatuan keluarga, pemukiman pengungsi, bantuan pembangunan, dan bantuan darurat. Intervensi dari International Committee of the Red Cross (ICRC, Komite Palang Merah Internasional), Catholic Relief Services (CRS), World Vision, dan Oxfam-UK sebagai tanggapan terhadap kelaparan tersebut diterima dengan baik, meskipun dengan hati-hati demi alasan kemanusiaan dan lainnya, meskipun ada keberatan tentang cara-cara CRS melakukan pekerjaannya. (Lihat Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan, untuk informasi dan komentar lebih lanjut tentang kerja ICRC dan CRS.) Foto-foto korban kelaparan dan informasi lainnya juga digunakan untuk menunjukkan dampak perang dan untuk memobilisasi opini publik. Seperti sudah disebut, Penyelidikan Kongres dan Parlemen terhadap masalah ini dilakukan di Amerika Serikat dan Australia.

461. Tiga awal baru terjadi selama periode ini. Masing-masing memiliki konsekuensi jangka panjang yang positif dan menjadi sumber harapan di tengah kesuraman.

.....
* Delegasi ini dipimpin oleh W.L. Morrison MP dan berkunjung ke Timor-Leste Juli-Agustus 1983.

462. Pertama, diaspora Timor-Leste, yang telah menetap di Portugal, Makau, dan Australia, menjadi lebih aktif. Organisasi-organisasi yang mereka dirikan menentang persepsi bahwa hanya minoritas warga Timor-Leste saja yang berhaluan nasionalis, dan kemudian menjadi sumber inspirasi dan informasi penting untuk komunitas yang lebih luas di negara sendiri dan di luar negeri.

463. Kedua, periode ini menyaksikan permulaan kolaborasi internasional. Meskipun fenomena ini memuncak pada 1990-an, fondasinya telah diletakkan saat itu. Contoh yang patut diperhatikan yaitu sidang Pengadilan Permanen Rakyat (Permanent People's Tribunal) tentang Timor-Leste, yang diadakan di Lisbon 19-21 Juni 1981. Sidang ini dimaksudkan untuk mengangkat profil Timor-Leste selama periode suram, khususnya di Portugal, mengumpulkan dari lima belas negara para pemimpin Fretilin, para pengacara, kaum akademisi, para politikus, jurnalis, perwakilan Gereja, dan orang-orang Indonesia. Organisasi solidaritas Portugis, CDPM (Commissão para os Direitos do Povo Maubere, Komisi untuk Hak Rakyat Maubere), dibentuk pada saat itu.

464. Ketiga, Gereja Katolik di Timor-Leste muncul menjadi pengkritik yang terbuka tentang tingkah laku militer Indonesia. Ini merupakan perkembangan politik yang luarbiasa penting bagi Timor-Leste, baik secara domestik maupun internasional, karena sebelumnya Gereja merupakan lembaga yang tidak representatif dan memiliki hubungan yang kurang baik dengan Fretilin. Peranan Gereja berkembang pesat setelah invasi Indonesia,^{*} dan menjadi kekuatan politik meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para pastor dan mendapat tekanan dari Vatikan. Intervensi Gereja menutup kerugian militer lebih lanjut yang dialami Fretilin dan merupakan pukulan serius bagi Indonesia yang berharap Gereja dan negara akan dapat bekerjasama dalam membangun provinsi baru. Melalui jemaah keagamaannya, Gereja juga memiliki hubungan internasional yang sangat berguna dan hubungan khusus dengan Vatikan. Gereja dikritik di beberapa kalangan,[†] tapi para pendukung internasional dapat menunjuk pada pernyataan-pernyataan Gereja sebagai bukti bahwa masalah Timor-Leste belum selesai dan bahwa Resistansi tidak hanya terbatas pada Fretilin. Keterlibatan Gereja juga melegitimasi masalah Timor-Leste bagi banyak orang yang sebelumnya masih bimbang atau khawatir akan adanya klaim yang menghubungkannya dengan paham komunis.

* Untuk lebih terperinci, lihat bagian tentang Vatikan di atas, paragraf 310 - 351. Menurut sebuah laporan Gereja Indonesia yang belum dipublikasikan, orang Katolik yang dibaptis adalah sekitar sepertiga dari populasi, tapi pada akhir 1976 sebagian besar orang Timor-Leste sudah mengklaim afiliasi Katolik. (*Notes on East Timor*, 2 November 1976.)

† Roger Peren, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, melaporkan kunjungannya ke Timor-Leste pada 1978. "Hanya anggota hierarki Katolik Roma, dari Paus ke bawah, telah secara terbuka bertindak dengan kritis terhadap pemerintah ini, tapi seiring waktu, kami semakin tidak menaruh kepercayaan pada pandangan-pandangan mereka." Dia mengklaim di bagian laporan selanjutnya bahwa pandangan negatif kalangan gereja ini mungkin disebabkan oleh "ketidakpuasan alamiah karena mereka tidak lagi memegang kekuasaan yang mereka nikmati di bawah rezim Portugis." (Paragraf 8 dan paragraf 86, 13 Januari 1978, Selandia Baru, East Timor OIA Material, Volume 1.)

465. Beberapa kesaksian para pastor yang pernah bekerja di Timor-Leste memperkuat perkembangan tersebut, termasuk di antaranya mantan utusan Portugis, Pastor Leoneto do Rego dan Pastor Reinaldo Cardoso, serta pastor-pastor Timor-Leste, Pastor Francisco Fernandes dan Pastor Apolinario Guterres. Kesaksian mereka dalam beberapa forum internasional diperkuat oleh kunjungan internasional Dom Martinho da Costa Lopes ke Oseania, Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa setelah keberangkatannya dari Timor-Leste. Kunjungannya ini diatur dan didanai oleh grup-grup masyarakat sipil, dan dalam kunjungan-kunjungan itu ia menggalakkan kampanye penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor-Leste. Setelah kunjungan Dom Martinho da Costa Lopes ke Jepang, Uskup Aloisius Soma memasukkan Timor-Leste ke dalam agenda Japanese Catholic Council for Justice and Peace (Dewan Katolik Jepang untuk Keadilan dan Perdamaian), dan pada 1987 menunjuk Suster Monica Nakamura sebagai petugas khusus untuk Timor-Leste. John Taylor dan Arnold Kohen memberitahu Komisi bahwa kunjungan Monsignor Lopes ke Inggris dan Amerika Serikat “sangat efektif”, karena berhasil menunjukkan kegagalan Indonesia untuk menguasai sebagian besar Timor-Leste dan mengonfirmasi bahwa para diplomatnya pada umumnya mewakili opini umum di wilayah tersebut.²⁴⁰ Efeknya adalah bahwa Gereja internasional, setelah beberapa tahun dalam kebimbangan, mulai bergerak dan bergabung dengan Gereja Timor-Leste dalam program advokasi bersama. Ini kemudian diperkuat oleh keterlibatan beberapa badan Protestan penting di Eropa, Amerika Serikat, Asia, dan Oseania, meskipun terdapat perbedaan pendirian mengenai isu itu dengan Gereja Protestan Indonesia.

Tahap ketiga: Membangun kembali dukungan masyarakat sipil 1983 - 1991

466. Meskipun pernah hampir binasa, pihak Resistansi berhasil selamat dari *Anschluss** Indonesia. Gejala utama tahap ini adalah dikembangkannya kembali Resistansi di Timor-Leste oleh Xanana Gusmão, tampilnya Xanana Gusmão sebagai pemimpin Resistansi, dan perubahan Resistansi tahap demi tahap menjadi gerakan nasionalis yang luas, sehingga di dalamnya dapat berperan semua lapisan masyarakat dan bukan hanya Fretilin serta militer. Seorang pemimpin lain juga muncul dalam tahap ini: Dom Carlos Felipe Ximenes Belo, yang diangkat sebagai kepala Gereja Katolik pada 1983 dan menjadi pembela yang gigih untuk penentuan nasib sendiri serta sumber inspirasi bagi masyarakat sipil internasional. Tiga perkembangan menjelang akhir periode tersebut secara tidak langsung juga mendukung perjuangan Timor-Leste untuk penentuan nasib sendiri. Tiga hal tersebut yaitu: keputusan Presiden Soeharto untuk membuka wilayah Timor-Leste, berakhirnya Perang Dingin, dan kunjungan Paus Yohanes Paulus II, satu-satunya pemimpin dunia yang berkunjung di tengah-tengah konflik sedang berlangsung.

* Kurt Waldheim, Sekjen PBB warga Austria, menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan tindakan Indonesia di Timor-Leste. Istilah itu berkenaan dengan invasi Adolf Hitler ke Austria pada Perang Dunia Kedua. Lihat memo Kantor Luar Negeri Inggris, 15 Mei 1976 (Arsip CAVR).

467. Hasil perubahan-perubahan yang dibawa oleh Xanana Gusmão membutuhkan waktu. Tapi, hasil terakhirnya tampak pada lebih kuatnya bukan saja gerakan Resistansi di dalam negeri, tapi juga front diplomasi serta diaspora Timor-Leste dan masyarakat sipil internasional. Pada 1983, setelah dicekal oleh pemerintah Australia, delegasi para pemimpin Fretilin berhasil berkunjung ke Australia dan berpidato di depan 1.500 orang dari segala lapisan masyarakat di Melbourne, diorganisasi oleh Australia East Timor Association. José Ramos-Horta terus bersafari untuk membangkitkan dukungan di setiap negara yang ia kunjungi.* Dengan dukungan dan kadang-kadang nasihat dari grup-grup masyarakat sipil, orang Timor-Leste lainnya pun mulai melakukan lobi internasional.†

468. Sebagai pemimpin baru dalam Gereja Katolik yang sekarang mempunyai kebijakan arus-utama, pandangan Uskup Belo berpengaruh di lingkungan masyarakat sipil internasional. Ia melanjutkan kebijakan Dom Martinho da Costa Lopes dalam menyatakan keprihatinan umum tentang HAM, tapi lebih berfokus pada perlunya penyelesaian jangka panjang. Kegigihannya dalam membela kebijakan penentuan nasib sendiri punya arti sangat penting untuk mengakhiri konflik dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, serta menumbuhkan semangat pada para pendukung Timor-Leste di luar negeri yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahnya bahwa masalah hak asasi manusia bagi rakyat Timor-Leste dapat dicapai tanpa adanya penyelesaian politik.

469. Tahap ini ditandai dengan pertumbuhan dan bertambah kuatnya sejumlah jaringan baru baik internasional maupun nasional. Victor Scheffers (Netherlands Catholic Commission for Justice and Peace - Komisi Katolik Belanda untuk Keadilan dan Perdamaian) dan Robert Archer (Catholic Institute for International Relations - Lembaga Katolik untuk Hubungan Internasional) di London mendirikan Christian Consultation on East Timor (Konsultasi Kristen tentang Timor-Leste) yang menjadi forum tahunan besar untuk gereja-gereja dan organisasi masyarakat sipil, khususnya di Eropa. Grup-grup warga Jepang bekerja untuk menentang kebisuan tentang masalah Timor-Leste di kalangan media massa, kaum akademisi, parlemen, grup-grup keagamaan, dan pemerintah. Mereka mengundang José Ramos-Horta ke Jepang pada 1985 dan Dom Martinho da Costa Lopes pada tahun berikutnya. Mereka bekerja dengan para anggota Parlemen Jepang, dipimpin oleh Satsuki Eda, membentuk Diet Members Forum on East Timor (Forum Anggota Diet tentang Timor-Leste). Pada 1987, mereka mengunjungi Timor-Leste dan mengajukan petisi pada PBB. Melalui usaha para aktivis seperti Akihisa [Aki] Matsuno dan Kiyoko Fukusawa, Free East Timor Coalition (Koalisi Timor-Leste Merdeka) dibentuk pada 1988 dan tumbuh menjadi koalisi beranggotakan sekitar

* Sebagai contoh, José Ramos-Horta mengunjungi Jepang pada Maret 1985 atas undangan kelompok masyarakat sipil Jepang, menjadikannya orang Timor-Leste pertama yang memperkenalkan masalah Timor-Leste secara langsung ke publik Jepang. (Suster Monica Nakamura, kesaksian diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Dili, 15-17 Maret 2004.)

† Sebagai contoh, kunjungan Agio Pereira, Abel Guterres, dan Mimi Ferreira ke wilayah Pasifik dan keikutsertaan Emilia Pires dan Ines de Almeida pada Konferensi Perempuan Dunia di Nairobi 1985.

40 kelompok di seluruh Jepang. Pada 1995, masyarakat sipil membantu mengubah posisi Jepang dari pro-Indonesia menjadi mendukung proses PBB di Timor-Leste.

470. Pada November 1987, Christians in Solidarity with East Timor (CISSET - Umat Kristen dalam Solidaritas dengan Timor-Leste) mengadakan konsultasi masyarakat sipil Asia-Pasifik pertama tentang Timor-Leste. Diadakan di Filipina, konsultasi tersebut menekankan perlunya partisipasi rakyat Timor-Leste dalam mencari penyelesaian politik. Di Kanada, mengikuti pekerjaan Canada Asia Working Group dan Indonesia East Timor Program, East Timor Alert Network (ETAN) dibentuk pada 1986 atas inisiatif Elaine Briere. ETAN merupakan salah satu dari sedikit organisasi yang mempersoalkan tanggungjawab sektor swasta terhadap masalah hak asasi manusia di Timor-Leste. Pada 1997, ETAN memproduksi siaran video berjudul *The Sellout of East Timor*, yang berisi kritik sangat pedas terhadap hubungan bisnis Kanada dengan Indonesia. Foto-foto Timor-Leste karya Briere yang menakutkan, yang diambil pada 1974, digunakan oleh organisasi-organisasi pendukung di banyak negara.* Grup-grup solidaritas di Eropa menciptakan dimensi baru dalam kampanye mereka dengan memperluas jaringan mereka dengan menyertakan Campaign Against Arms Trade (CAAT).[†] Pada 1988, jaringan internasional Parliamentarians for East Timor (PET) dibentuk. Dalam kekuatan penuh, PET terdiri atas 900 orang anggota parlemen di 40 negara. PET melakukan berbagai inisiatif, termasuk memberikan presentasi kepada Sekjen PBB tentang nasib Timor-Leste dan merekomendasikan masyarakat Timor-Leste untuk hadiah Nobel Perdamaian.[‡]

471. Sejumlah sumber informasi baru muncul pada waktu itu dan memberi tambahan sangat penting pada materi yang beredar tentang Timor-Leste. Sumber-sumber tersebut termasuk *Timor-Leste: Mensagem aos vivos* oleh António Barbedo de Magalhães (Portugal, 1983); *Timor: A People Betrayed*, oleh James Dunn (Australia, 1983); *Em Timor-Leste, a paz é possível* (laporan berkala Portugis dihasilkan oleh Jean Pierre Catry, 1983-91); *East Timor: The Struggle Continues*, diedit oleh Torben Retboll (Kopenhagen, 1984); *Timor: Past and Present* oleh Finngeir Hiorth (Norwegia, 1985); *The War Against East Timor* oleh Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong (Britain, 1984); *Funu: The Unfinished Saga of East Timor* oleh José Ramos-Horta (AS, 1987); *Timor Link*, jurnal triwulan yang didirikan pada 1985 oleh Robert Archer, dan kemudian diedit oleh John Taylor dan Catherine Scott, diterbitkan oleh Catholic Institute for International Relations (CIIR); *The Shadow over East Timor*,

* Aktivist Timor-Leste, Abe Barreto dan Bella Galhos, memberi dimensi Timor-Leste yang penting dalam usaha solidaritas di Kanada, saat mereka membelot dari suatu program kepemudaan Kanada dan melibatkan diri dalam kampanye ETAN pada 1994-1999.

† CAAT didirikan di London 1974 untuk mengakhiri perdagangan senjata internasional, khususnya subsidi dan dukungan pemerintah terhadap ekspor senjata kepada rezim-rezim yang menindas masyarakatnya melalui konflik bersenjata. CAAT bertujuan mengekspose relasi militer barat dengan Indonesia yang memungkinkan pemerintah Soeharto tetap berkuasa dan tidak mendukung penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste.

‡ Parliamentarians for East Timor (PET) awalnya diketuai Lord Avebury, yang juga ketua All-Party Parliamentary Human Rights Group di Parlemen Inggris. Dukungan sekretariat disediakan oleh Sharon Scharfe di Kanada.

video Denis Freney, James Kesteven, dan Mandy King (Sydney, 1987); *Buried Alive: The Story of East Timor*, video oleh Gil Scrine, Fabio Cavadini, dan Rob Hibberd (Sydney, 1989); *Descolonização de Timor: Missão impossível*, oleh Mario Lemos Pires (Portugal, 1991); *Timor-Est, le genocide oublié* oleh Gabriel Defert (Paris, 1992). Amnesty International dan Human Rights Watch, organisasi baru yang berbasis di New York, juga menerbitkan sejumlah laporan tentang Timor-Leste dalam periode ini. Kedua organisasi tersebut bersikap netral tentang isu penentuan nasib sendiri, meskipun mereka bersaksi pada Komite Khusus Dekolonisasi PBB. Laporan independen dan lengkap mereka tentang hak asasi manusia dianggap lebih kredibel dibanding sangkalan resmi Indonesia dan berhasil meyakinkan banyak pihak di kalangan masyarakat sipil tentang perlunya penyelesaian selayaknya konflik tersebut dengan melalui proses penentuan nasib sendiri yang sejati.*

472. Selama periode ini masyarakat sipil berhasil meningkatkan perhatian PBB. Karena kekhawatiran akan nasib Timor-Leste di PBB setelah pemungutan suara tertutup pada Sidang Umum pada 1982, antara 20 sampai 25 organisasi nonpemerintah internasional membuat “ziarah tahunan” ke New York untuk mengajukan permohonan kepada Komite Khusus Dekolonisasi PBB guna mendukung kebijakan penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste.† Sangat sedikit, walaupun ada, isu-isu lain dalam agenda Komite yang mendapat perhatian sebanding dari masyarakat sipil. Para pemohon dalam Pertemuan 1986 antara lain adalah pemerhati ahli Indonesia, Profesor Benedict Anderson dari Cornell University; Elizabeth Traube, ahli kebudayaan Timor-Leste; dan sejumlah organisasi nonpemerintah dari yang besar seperti Asia Watch sampai grup solidaritas yang kekurangan dana tetapi sangat terlibat, seperti Hobart East Timor Committee dari Australia.

473. Organisasi-organisasi nonpemerintah juga meningkatkan masukan mereka kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, baik dalam Sub-Komisi Minoritas maupun dalam debat tahunan tentang penentuan nasib sendiri. Usaha ini sering tidak dihargai karena sedikit saja pemerintah yang menyebut-nyebut Timor-Leste dalam pernyataan mereka atau menyambut kesempatan lobi di tempat minum kopi Komisi. Sebagai tambahan, para advokat masyarakat sipil harus menghadapi kritik pemerintah Indonesia di hadapan seluruh dunia yang

* Dalam kesaksiannya ke Komisi, Ian Martin mengakui para peneliti Amnesty Internasional yang mengerjakan penelitian atas Timor-Leste selama penjajahan Indonesia, yaitu Anthony Goldstone, Sidney Jones, Geoff Robinson, dan Kerry Brogan [Kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.] Sidney Jones kemudian bekerja untuk Human Rights Watch dan menghasilkan sejumlah laporan penting tentang Timor-Leste. Pentingnya pekerjaan organisasi-organisasi ini dapat dilihat dari tuduhan-tuduhan pemerintah Indonesia bahwa klaim-klaim mereka tidak benar dan bermotivasi politik. Lihat surat Departemen Luar Negeri Indonesia kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, 2 November 1994, dalam Krieger hal.231.

† Francisc Vendrell, seorang mantan pejabat PBB, memberi kesaksian kepada Komisi bahwa dia yang memicu ide mendorong organisasi-organisasi nonpemerintah internasional untuk mengajukan permohonan ke Komite Khusus Dekolonisasi PBB. [Kesaksian diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.] Praktik ini didorong oleh José Ramos-Horta dan pada 1991 telah dikoordinasi oleh International Federation for East Timor (IFET) yang dilahirkan oleh Kan Akatani, seorang pensiunan diplomat Jepang dan perwakilan Japanese Catholic Council for Justice and Peace.

menyebut mereka membuat klaim-klaim yang hanya berdasar pada tujuan politik. Perwakilan masyarakat sipil berubah-ubah dari tahun ke tahun. Organisasi nonpemerintah yang berbicara membela Timor-Leste pada sidang Sub-Komisi Minoritas pada 1987 adalah Pax Romana, Pax Christi International, National Aboriginal and Islander Legal Service, serta Human Rights Advocates. Intervensi masyarakat sipil sering merupakan praktik kolaboratif berdasarkan masukan dari organisasi nonpemerintah di berbagai bagian dunia. Organisasi nonpemerintah internasional yang diterima oleh PBB kadang mengorbankan hak bicara mereka untuk memberi kesempatan pada perwakilan Timor-Leste untuk berbicara atas nama mereka, atau menyediakan dana untuk mereka. Partisipasi José Ramos-Horta di Sub-Komisi PBB pada Agustus 1991 didanai oleh Community Aid Abroad (CAA) dan Australian Council for Overseas Aid (ACFOA). Hal itu menghasilkan kunjungan Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan pada tahun tersebut ke Timor-Leste.

474. Institusi-institusi arus-utama mulai mempertanyakan peraturan Soeharto pada periode ini. Berita-berita yang mengkritik kekayaan dan kebijakan antidemokrasi Soeharto muncul di pers Barat sebelum kunjungan “Winds of Freedom” Presiden AS Ronald Reagan ke Asia pada 1986. Indonesia membalas dengan memberangus media yang tanggung jawab atas pemberitaan tersebut, tapi ini justru menghasilkan kontroversi lebih jauh dan memperkuat alasan para pengkritik. Pada saat yang sama, lebih daripada 100 anggota Kongres menekan Presiden Ronald Reagan untuk mengangkat masalah Timor-Leste pada Presiden Soeharto. Ini menjadi pertanda penting yang diikuti oleh advokasi bertahun-tahun oleh masyarakat sipil, baik di dalam maupun di luar Indonesia.*

475. Pada 1989, beberapa kesempatan terbuka bagi Timor-Leste dan jaringan dukungan internasionalnya pun berkembang. Sejak 1 Januari 1989, Presiden Soeharto membuka Timor-Leste untuk pertama kali, setelah tertutup sejak Desember 1975. Para individu dan organisasi dari masyarakat sipil yang peduli mengambil kesempatan ini untuk mengunjungi Timor-Leste dan, meskipun terdapat larangan dan bahaya, melakukan kontak dengan pihak Resistansi, menyediakan bantuan materi, bertindak sebagai kurir dua-arah, serta membangkitkan perhatian baru di negara-negara mereka. Diperkirakan sekitar 3.000 orang asing telah berkunjung pada 1989-91.† Untuk memfasilitasi komunikasi, Australia East Timor Association menerbitkan kamus Tetum-Inggris pertama, karya Cliff Morris, seorang veteran Perang Dunia Kedua.

* Artikel pers tersebut adalah David Jenkins, “After Marcos, now for the Soeharto billions”, *Sydney Morning Herald*, 10 April 1986, dan artikel oleh A.M. Rosenthal di *New York Times* mengenai represi di Indonesia. Laporan *The Sydney Morning Herald* menimbulkan kontroversi cukup besar karena Soeharto disamakan dengan diktator Filipina yang dijatuhkan, Ferdinand Marcos.

† Bantuan terhadap Resistansi tidak berupa bantuan militer tetapi termasuk barang-barang seperti obat, kamera video, dan telepon. Pada saat meninggalkan Timor-Leste, para pengunjung ini membawa dokumen-dokumen, rekaman wawancara, foto-foto, dan materi lain untuk digunakan di luar, termasuk bagi para pemimpin Resistansi di luar Timor. Beberapa catatan terdapat pada “*Opening Up: Travellers Impressions of East Timor 1989-1991*”, Kirsty Sword dan Pat Walsh (ed.), (Melbourne, AETA 1991)

476. Contoh penggunaan kesempatan ini oleh masyarakat sipil adalah wawancara yang berani dengan pemimpin Resistansi Xanana Gusmão di persembunyiannya di gunung, yang dilakukan pada September 1990 oleh seorang pengacara dan anggota serikat buruh, Robert Domm. Wawancara tersebut disiarkan oleh Australian Broadcasting Commission dan telah sangat meningkatkan profil dan status internasional Xanana Gusmão.* Jumlah orang Timor-Leste yang belajar dan bekerja di Indonesia juga meningkat, sebagai konsekuensi dari dibukanya kawasan Timor-Leste. Ini memungkinkan para nasionalis di antara mereka untuk membangun hubungan dengan masyarakat sipil Indonesia dan pihak-pihak internasional yang bekerja di atau berkunjung ke Jakarta, termasuk wakil-wakil media massa.

477. Tamu terpenting setelah Timor-Leste dibuka adalah Paus Yohanes Paulus II, yang berkunjung pada Oktober 1989. Pengakuan Paus tentang adanya konflik di Timor-Leste dan perlunya penyelesaian secara damai bertentangan dengan sebagian besar pemerintah dunia dan menjadi inspirasi bagi rakyat Timor-Leste serta para pendukung internasionalnya. Secara internasional dampak kunjungannya diperbesar ketika terjadi demonstrasi yang pertama kali sejak invasi Indonesia, yang digelar pada akhir misanya di Tasitolu dan diberitakan oleh media massa dunia. Pada 9 November 1989, runtuhnya Tembok Berlin secara simbolis menandai berakhirnya Perang Dingin. Peristiwa itu bergema sangat kuat pada masyarakat sipil pro-Timor-Leste di seluruh dunia, dan melumpuhkan dua dogma penting yang digunakan untuk melawan advokasi mereka terhadap hak penentuan nasib sendiri: bahwa integrasi Timor-Leste dengan Indonesia diperlukan untuk menahan penyebaran komunisme, dan bahwa kekuasaan Indonesia atas Timor-Leste “tidak dapat diganggu-gugat”.

Tahap keempat: Titik-titik balik 1991 - 1998

478. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam perjuangan Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri. Periode tersebut dimulai dengan bencana hebat yang menimpa militer Indonesia dalam bentuk pembantaian Santa Cruz, dan 12 bulan kemudian diikuti dengan penangkapan Xanana Gusmão. Pada 1996, Hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada para pembela hak penentuan nasib sendiri yang terkemuka, yaitu Uskup Belo dan José Ramos Horta, dan pada 1997 Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB yang baru, memutuskan mengintensifkan diplomasi PBB. Periode ini berakhir dengan jatuhnya pemerintah Soeharto pada Mei 1998. Masyarakat sipil telah memberikan kontribusi mereka pada setiap titik balik ini, dan menggunakannya untuk memajukan isu penentuan nasib sendiri. Teknologi komunikasi baru juga mulai tersedia pada periode ini dan cukup mampu meningkatkan kapasitas serta pengaruh masyarakat sipil.

* Wawancara juga mengumumkan tawaran Xanana Gusmão untuk berbicara dengan Indonesia tanpa pra-kondisi di bawah naungan PBB. Indonesia menolak tawaran tersebut yang dipromosikan Timor-Leste Talks Campaign, yang menerbitkan buletin berjudul “*The Missing Peace*”. Catatan kunjungan berbahaya Domm ke pergunungan dengan pemandu orang Timor dan teks wawancara terdapat *East Timor: Keeping the Flame of Freedom Alive*, ACFOA Development Dossier No 29, February 1991.

479. Tidak seperti kekejaman lain yang diderita di Timor-Leste, pembantaian Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991 menimbulkan titik-balik pendapat dunia tentang kawasan ini. Ini sebagai akibat dari hadirnya para pengamat internasional ketika peristiwa menyedihkan itu terjadi serta pemaparan mereka kepada dunia luar terhadap tragedi tersebut melalui media cetak, radio, dan televisi. Terbunuhnya seorang warga asing, Kamal Bamadhaj, menambah kemarahan publik, khususnya di Selandia Baru, Australia, dan Malaysia.^{*} Rekaman video peristiwa penembakan dan teror yang dibuat dengan risiko tinggi oleh Max Stahl, diselundupkan keluar dengan berani dari Timor-Leste ke Amsterdam oleh seorang wartawan Belanda, Saskia Kouwenberg.[†] Bukti yang kuat ini, ditambah dengan foto-foto yang diambil oleh fotografer Inggris Steve Cox yang babak belur dianiaya,²⁴¹ mengonfirmasi tuduhan yang selama itu diajukan oleh para pendukung masyarakat sipil, yaitu bahwa Timor-Leste adalah masyarakat yang ada dalam cengkeraman ketegangan, bahwa penindasan militer adalah realitas, dan bahwa tindakan penentuan nasib sendiri adalah kunci untuk mencapai perdamaian.

480. Keterlibatan masyarakat sipil internasional meningkat pesat setelah tragedi Santa Cruz. Pada 19 November 1991, Portugal mengadakan hari berkabung nasional. Tokoh-tokoh masyarakat sipil terkemuka menandatangani surat terbuka kepada Presiden AS untuk memprotes Amerika Serikat yang telah menerima kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste meskipun tanpa dilakukannya tindakan penentuan nasib sendiri. Para mahasiswa Portugis yang tergabung dalam Forum Estudante dan Missao Paz por Timor menggalang dana untuk menyewa kapal feri Portugis, *Lusitania Expresso*, untuk melakukan protes atas situasi tersebut dengan berlayar ke Timor-Leste. Segera setelah pembantaian Santa Cruz, East Timor Action Network (ETAN) dibentuk di Amerika Serikat oleh Charles Scheiner, John Miller, dan lainnya dengan tujuan mengubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk mendukung penentuan nasib sendiri Timor-Leste. Jurnalis AS, Alan Nairn dan Amy Goodman, yang hampir tidak selamat dari pembantaian Santa Cruz, berkampanye ke seluruh Amerika Serikat, memberi andil bagi perkembangan ETAN. Pada 2000, ETAN telah didukung oleh sekitar 10.000 anggota dengan 27 grup lokal di seluruh Amerika Serikat. Juga pada November, International Platform of Jurists for East Timor (IPJET), dibentuk di Belanda dipimpin oleh Pedro Pinto Leite. Tujuan IPJET adalah memobilisasi ahli hukum internasional untuk mendukung usaha penentuan nasib sendiri. Ini dilakukan melalui konferensi, publikasi, dan petisi, termasuk ke PBB dan Uni Eropa. Pada 1995, IPJET sudah memiliki 250 anggota di

* Orangtua Kamal Bamadhaj berasal dari Selandia Baru dan Malaysia; saat itu ia adalah mahasiswa di Australia dan aktif mendukung hak asasi manusia untuk Timor-Leste. Pada 12 November ia sedang bekerja sebagai penerjemah untuk Bob Muntz dari Oxfam-Community Aid Abroad. Muntz hampir terbunuh dan kembalinya ke Australia dia tanpa kenal lelah memberikan kesaksian sebagai saksi mata tentang kekejaman itu. Pada 1994, dalam kasus *Todd vs Panjaitan*, Center for Constitutional Rights (CCR) yang berbasis di New York berhasil menuntut Mayjen Sintong Panjaitan atas perannya dalam pembantaian Santa Cruz. Ia diperintahkan membayar USD14 juta biaya kerugian ke Helen Todd, ibu Kamal Bamadhaj. Pembayaran tidak pernah dilakukan. Helen Todd memberi kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, 19-21 November 2003.

† Saskia Kouwenberg menyelundupkan sebagian kaset tersebut dalam pakaiannya. Max Stahl sendiri membawa sebagian kaset keluar dan sedikitnya satu kaset tidak dapat diselamatkan dari tempat persembunyiannya di permukiman Santa Cruz.

lebih daripada 50 negara. Dukungan publik dimobilisasi di Irlandia oleh East Timor Ireland Solidarity Campaign (ETISC) yang dibentuk oleh Tom Hyland di Dublin setelah film stasiun televisi Yorkshire yang berjudul *In Cold Blood: The Massacre of East Timor* ditayangkan pada Januari 1992, menggunakan gambar-gambar pembantaian milik Max Stahl. Hasil kerja ETISC merupakan contoh lain, di samping Portugal, di mana gerakan solidaritas dapat bekerja secara efektif dengan pemerintahnya. Dengan menyediakan informasi kritis dan memobilisasi energi komunitas rakyat Irlandia, ETISC mendukung peran utama pemerintah Irlandia dalam kasus Timor-Leste di Uni Eropa pada 1990-an. Di Skotlandia, Glasgow University East Timor and Indonesia Support Group dibentuk pada pertengahan 1990-an.

481. Penangkapan Xanana Gusmão oleh militer Indonesia pada 20 November 1992 pada awalnya menimbulkan depresi di kalangan diaspora Timor dan masyarakat sipil. Tetapi cepat disadari bahwa cara terbaik untuk melindungi pemimpin Resistansi adalah dengan mengampanyekan profil internasionalnya, membangun publisitas yang telah dihasilkan oleh masyarakat sipil, dan bahwa penahanan dan pengadilan Xanana Gusmão justru memberi kesempatan untuk melancarkan kampanye baru. Organisasi-organisasi hak asasi manusia sangat memperhatikan proses pengadilannya di Dili pada Mei 1993. Pemerintah Indonesia menolak memberi visa untuk Rodney Lewis, yang meminta mengamati proses pengadilan Gusmão, sebagai wakil dari International Bar Association and the Law Council of Australia. Protes terdengar semakin keras setelah hakim pengadilan memerintahkan Gusmão berhenti dengan pembelaannya yang baru tiga halaman dibacanya, dengan menyatakan bahwa pembelaan itu “tidak relevan” dan meminta serta menahan dokumen pembelaan tersebut. Sementara itu, kelompok-kelompok masyarakat sipil menganggap dokumen pembelaan Gusmão sangat relevan. Mereka menerjemahkan dan menerbitkan salinan pembelaan tersebut, yang diselundupkan dan diterbitkan lebih sebagai gugatan terhadap Indonesia dan sekutu-sekutunya ketimbang sebagai pembelaan. Kelompok-kelompok masyarakat sipil itu juga menilai proses pengadilan Gusmão sebagai cacat hukum, sama seperti yang dialami Timor-Leste sendiri.²⁴² Portugal dan Amnesty International, antara lain, mengutuk pengadilan tersebut. Semangat perlawanan di pihak pembela juga memberi ilham pada para pendukung dan melegakan mereka, setelah disembarkannya isu bahwa setelah Gusmão tertangkap, dia menerima kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste dan mengimbau para pengikutnya agar menyerahkan diri.

482. Grup-grup solidaritas mengampanyekan “Xanana dalam tahanan” sebagai simbol Timor-Leste yang terjajah dan mengaitkan nasib Xanana dengan nasib Timor-Leste. Stiker-stiker bertuliskan “Bebaskan Xanana, Bebaskan Timor-Leste” beredar di ruang konferensi pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina 1993, termasuk ditempel di balik pintu-pintu toilet yang diduga akan digunakan oleh delegasi pemerintah Indonesia di konferensi tersebut. Kampanye dalam bentuk kartu pos, doa massal, demonstrasi, dan tulisan-tulisan tentang Gusmão berlipat ganda. Pada September 1994, United Nations Association of Australia memberi penghargaan *in absentia* kepada Xanana sebagai pembela hak asasi manusia. Ulangtahunnya menjadi isyarat berkumpul bagi mereka setiap tahun, menandai berjalan pelannya

hukuman seumur hidup baginya serta solidaritas para pendukungnya dan komitmen mereka pada apa yang ia anjurkan, termasuk masalah referendum.

483. Ironisnya, pemenjaraan Xanana Gusmão di Jakarta justru memungkinkan dia berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat sipil dan komunitas internasional, dibanding pada saat dia ada di pergunakan terpicil di Timor-Leste. Kirsty Sword Gusmão sangat berperan dalam melakukan hal tersebut, khususnya selama tahun 1992 - 1996 ketika ia bertugas di Jakarta. Selain melakukan pekerjaan tetapnya, Kirsty bertugas sebagai sekretaris klandestin Resistansi dan antara lain dibantu oleh Victoria Markwick-Smith, yang berpengalaman dalam kegiatan ilegal Timor di Jakarta, dan didukung dari luar negeri oleh keluarganya dan jaringan kecil teman-temannya yang tepercaya. Meski banyak tantangan dan risiko, kegiatan ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah tingkat tinggi, yaitu antara Xanana Gusmão dalam sel penjara dengan duta besarnya, José Ramos-Horta, dan banyak orang lainnya lagi. Ini juga memungkinkan terjadinya banyak diskusi, baik pribadi maupun resmi, antara Xanana Gusmão dan organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia, dan bahkan memungkinkan pelelangan di luar negeri lukisan-lukisan yang dibuatnya di penjara, dalam rangka pengumpulan dana untuk Resistansi.*

484. Film John Pilger, *Death of a Nation*, banyak berperan dalam memperkuat keterlibatan dunia pada Timor-Leste, menyusul pemutarannya di Jenewa pada saat sidang tahunan Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada awal 1994. Misalnya saja, setelah film itu ditayangkan di televisi nasional di Selandia Baru, para anggota parlemen membuat petisi dan pemerintah Selandia Baru menghapus kebijakannya yang menyatakan bahwa status Timor-Leste tidak dapat diubah lagi.

485. Pada 1994, Asia Pacific Coalition for East Timor (APCET) dibentuk di Filipina. APCET mengadakan beberapa konferensi yang diatur oleh sekretariatnya, Initiatives for International Dialogue (Inisiatif-inisiatif untuk Dialog Internasional), dipimpin oleh Gus Miclat. Masyarakat sipil telah aktif di beberapa negara Asia selama beberapa tahun, tapi ini merupakan awal dari solidaritas untuk Timor-Leste yang terkoordinasi dan terus berjalan di seluruh Asia. Berturut-turut konferensi APCET di Filipina, Malaysia, dan Thailand menentang tanggapan yang bersifat bermusuhan dari Indonesia dan sekutu-sekutu dekatnya di ASEAN. Mereka juga menentang pendapat beberapa pemerintah Asia bahwa hak asasi manusia tidaklah universal, dan anggapan dari beberapa negara Barat bahwa Timor-Leste tidak memiliki dukungan di kawasan Asia. Dua organisasi masyarakat sipil diwakilkan dalam konferensi APCET 1995 di Kuala Lumpur, dan tidak lama kemudian Solidamor (Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Timur) didirikan di Jakarta. Salah satu bentuk kegiatan APCET tentang Timor-Leste adalah dikumpulkannya orang-orang dari komunitas tertindas di kawasan Asia. Para warga Timor peserta APCET bertemu

.....
* Kirsty Sword Gusmão mengunjungi Timor-Leste 1991 membantu stasiun televisi Yorkshire dengan menyelesaikan film *In Cold Blood*. Usahanya untuk penentuan nasib sendiri diceritakan Kirsty Sword Gusmão dan Rowena Lennox dalam bukunya *A Woman of Independence*, Macmillan, Sydney, 2003. Contoh-contoh komunikasi Xanana Gusmão dengan masyarakat sipil, termasuk pesan-pesan terhadap *East Timor Talk Campaign*, HJC Princen, dan perempuan-perempuan Ploughshares for Peace terdapat di otobiografi *To Resist is To Win*.

dengan para aktivis dari Myanmar, Sri Lanka, Mindanao, Aceh, dan Papua Barat, membantu mengembangkan hubungan-hubungan yang masih berlanjut hingga hari ini. Asia Students Association (ASA) yang berbasis di Hong Kong adalah afiliasi penting bagi APCET. Sekretariatnya bekerja keras untuk membawa isu Timor-Leste ke gerakan-gerakan mahasiswa di negara-negara kawasan tersebut.

486. Penggunaan senjata, yang dipasok negara Barat, untuk pembantaian Santa Cruz, mendorong masyarakat sipil untuk meningkatkan imbauan agar dilakukan embargo senjata terhadap Indonesia.[†] Kampanye ini sangat vokal terdengar di Amerika Serikat dan Inggris, didukung oleh Campaign Against Arms Trade. Pada Januari 1996, empat perempuan dari Ploughshares for Peace memasuki pabrik pesawat Inggris dan dengan menggunakan martil melumpuhkan jet tempur British Hawk yang sedang dipersiapkan untuk dikirim ke Indonesia. Pesawat Hawk diberitakan telah digunakan untuk melawan Resistansi di Timor-Leste dan empat perempuan tersebut mendesak agar pengiriman Hawk dibatalkan selama tiga tahun. Inggris negara pemasok senjata terbesar kedua bagi Indonesia. Perempuan-perempuan tersebut, Andrea Needham, Lotta Kronlid, Joanna Wilson, dan Angie Zelter, melaporkan perbuatan mereka kepada perusahaan Hawk terkait dan kemudian ditangkap. Pengadilan mereka pada 1996 memahat sejarah hukum: mereka dibebaskan oleh juri di Liverpool dengan menyatakan bahwa para perempuan tersebut bertindak demi mencegah kejahatan pemusnahan yang lebih besar.²⁴³ Namun, kampanye tersebut gagal mengubah kebijakan bantuan militer Inggris dan Amerika Serikat terhadap Indonesia saat itu.[‡]

487. Inisiatif penting lainnya dalam periode tersebut adalah sejumlah seminar yang diadakan pada 1990-an oleh seorang profesor Portugis, António Barbedo de Magalhães.[‡] Seminar-seminar yang sebagian besar diadakan di Portugal itu menyatukan para aktivis dan kaum akademisi, termasuk dari Indonesia, untuk berbagi informasi dan mengembangkan kebijakan serta strategi tentang Timor-Leste. Di Australia, organisasi dan inisiatif baru terus bermunculan, Termasuk Australians for a Free East Timor (AFFET), yang didirikan di Darwin oleh aktivis lama Rob Wesley-Smith sekitar saat pembantaian Santa Cruz; cabang Australia East Timor Association di Sydney pada 1992;[§] Friends of East Timor yang berbasis

* Allan Nairn memberi kesaksian bahwa M-16 pasokan AS digunakan dalam pembantaian. Kesaksian kepada Komite Senat AS mengenai Hubungan Luar Negeri, 27 Februari 1992.

† Pemerintah Inggris bertahan dari tekanan publik dan membela penjualan senjata ke Indonesia dengan alasan bahwa Indonesia memiliki hak untuk membela diri, peralatan tersebut tidak digunakan melawan rakyat Timor-Leste, dan bahwa latihan militer Inggris akan memperbaiki penghargaan militer Indonesia pada hak asasi manusia dan demokrasi. Lihat Baroness Trumpington, House of Lords, 10 Juli 1992 (Krieger, hal. 302)

‡ Barbedo de Magalhães pertama kali mengunjungi Timor-Leste pada 1975 dan sangat tertarik pada kebijakan pendidikan Fretilin. Dia adalah pengarang *East Timor: Indonesian Occupation and Genocide*, Oporto University, 1992 dan publikasi-publikasi lain termasuk *Timor-Leste na encruzilhada da transição Indonésia*, Gradiva, 1999.

§ Pembuat film tentang Timor-Leste, Gil Scrine, adalah orang pertama yang memanggil rapat. Di bawah Jefferson Lee dan Andrew McNaughtan, Australian-East Timor Association (AETA) di Sydney mengembangkan suatu profil internasional dan, melalui kunjungan-kunjungan oleh McNaughtan, membuka hubungan langsung dengan Resistansi di Timor-Leste.

di Perth; Mary McKillop Institute of East Timorese Studies (MMIETS) didirikan pada 1993 di Sydney oleh Sisters of St Joseph; East Timor International Support Centre di Darwin, diketuai oleh Juan Federer yang mendirikan Timor Aid pada 1998; di Melbourne, University Students for East Timor, East Timor Human Rights Centre, diketuai oleh Uskup Hilton Deakin; Action in Solidarity with Indonesia and East Timor (ASIET) yang dipimpin oleh Max Lane juga didirikan pada waktu itu dan menggalakkan hubungan antara grup-grup klandestin mahasiswa Timor-Leste dengan organisasi-organisasi sosialis yang berusaha menuntut perubahan di Indonesia. Australian Coalition for East Timor (ACET) menyiapkan diri untuk melakukan koordinasi, tapi sebagian besar grup-grup tersebut memilih konsultasi secara informal. International Federation for East Timor (IFET), yang didirikan pada periode ini, memiliki pengalaman yang mirip. IFET berhasil mencapai keanggotaan 30 organisasi dari 18 negara, tetapi banyak di antaranya yang ada dalam konstelasi organisasi pro-Timor yang sekarang menjadi besar dan beragam, meskipun tidak ikut serta dalam aksi mendukung penentuan nasib sendiri.

488. Pada waktu itu hak masyarakat Timor atas penentuan nasib sendiri di bidang kebudayaan diperkuat oleh inisiatif-inisiatif seperti pembukaan sekolah untuk anak-anak dari Timor di Darwin, yang disponsori oleh Jepang, dan usaha mengejutkan Profesor Geoffrey Hull dengan penerbitan buku pelajaran Tetum, *Mai Koalia Tetum*, justru di kala bahasa Tetum masih dilarang untuk penggunaannya sebagai bahasa resmi dan di sekolah-sekolah. Dibantu oleh Profesor Geoffrey Hull dan ahli bahasa Timor, Manuel Viegas, Mary McKillop Institute memperbanyak penerbitan buku-buku untuk tingkat sekolah dasar dalam bahasa Tetum, yang membantu Uskup Belo dalam perlawanannya terhadap kebijakan resmi ketika dia memilih untuk menggunakan bahasa Tetum untuk sekolah-sekolah Katolik di Timor-Leste.

489. Juga layak dicatat dalam periode ini ialah timbulnya pengaruh gambar-gambar video terhadap perhatian masyarakat, tumbuhnya organisasi-organisasi baru, dan koordinasi antara organisasi-organisasi itu, yang sangat diuntungkan oleh datangnya zaman internet. Pelayanan internet untuk umum pada 1990-an masuk kurang lebih bersamaan dengan keputusan Indonesia untuk dalam batas tertentu mempermudah orang masuk ke Timor-Leste. Kebersamaan waktu tersebut bukan saja suatu kebetulan yang menggembirakan; adanya internet juga sangat bertepatan dengan kebutuhan para aktivis hak asasi manusia karena cepat, murah, aman, mudah digunakan, interaktif, dan memiliki kapasitas serta jangkauan global yang sangat berarti. Informasi tentang Timor-Leste yang selama lima belas tahun sebelumnya merupakan komoditas langka, kini tersedia luas melalui internet berkat keterampilan dan komitmen para anggota masyarakat sipil. Situs *apakabar*, sebuah milis perintis elektronik gratis milik John MacDougall, meliputi baik tentang Indonesia maupun Timor-Leste; dan rintisan ini segera diikuti oleh *reg.easttimor*, yang menjadi pusat dan saluran utama untuk komunikasi cepat mengenai isu Timor-Leste ke seluruh dunia. Didirikan pada 1994 dan dikoordinasi oleh ETAN/US, *reg.easttimor* memungkinkan publik dan organisasi masyarakat sipil di Asia-Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara melakukan konferensi interaktif dan mengakses laporan serta bahan-bahan terjemahan tentang Timor-Leste dari layanan-layanan kabel dan media Indonesia, Portugis, dan lainnya, selain

juga dokumen-dokumen resmi dari PBB, pemerintah, dan sumber-sumber lainnya. Buku tentang Timor-Leste yang relatif sedikit tersedia sekarang bertambah banyak dengan adanya situs web yang dapat diakses publik. *TimorNet* di Universitas Coimbra, Portugal, menyediakan jaringan informasi tentang sejarah, geografi, dan kebudayaan Timor-Leste, dokumen-dokumen penting PBB, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, artikel, publikasi, dan saran untuk bertindak dan mengatur aksi. Para aktivis menggunakan email untuk memperbanyak informasi dan mengoordinasi serta mengatur kegiatan. Colin Renwick mendirikan suatu pusat mini untuk membantu organisasi-organisasi nonpemerintah kecil dan rawan di Indonesia dan Timor-Leste agar dapat memiliki akses internet yang murah, dapat diakses, dan aman, serta memberi pelatihan bagi beberapa aktivis Timor-Leste terpilih,²⁴³ sehingga meningkatkan efektivitas kaum klandestin. Dengan keterampilan ini, orang-orang Timor-Leste yang mendukung Xanana Gusmão di Jakarta dapat mengirim pesan-pesan email tertulis kepada rekan-rekan di luar negeri, termasuk kepada José Ramos-Horta.

490. Internet digunakan juga untuk tindakan langsung. Pada 1997, sebuah penyedia jasa internet Irlandia melancarkan protes terhadap pemerintah Indonesia, setelah Indonesia mendaftar domain milik Timor-Leste sebagai persiapan kemerdekaan politis. Pada tahun yang sama, Portuguese Hackers against Indonesia memasuki situs web milik militer Indonesia dan menyebarkan “propaganda” di situs web tersebut. Ini diikuti oleh penyusupan-penyusupan situs web di Departemen Luar Negeri Indonesia dan tempat-tempat lain, yang memicu serangan balasan terhadap situs web Portugis oleh para peretas (*hacker*) Indonesia. Perang *cyber* mengenai Timor-Leste berlanjut sampai 1999. Pada Agustus 1998, empat puluh lima domain Indonesia diretas, diikuti sabotase oleh Indonesia terhadap *Connect Ireland*, pencipta domain untuk Timor. Semua ini berakhir dengan perubahan kebijakan mengenai Timor-Leste oleh Presiden Habibie. Meskipun demikian, pemahaman bahwa Indonesia—tidak seperti Timor-Leste—rentan di bidang ini menginspirasi José Ramos-Horta untuk mengancam, pada Agustus 1999, bahwa ia akan meluncurkan kampanye internet yang “nekat dan ganas”, jika Indonesia menolak menghormati hasil referendum 30 Agustus.²⁴⁴

491. Keputusan Komite Nobel Norwegia untuk memberi penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian kepada Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo dan José Ramos-Horta pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional sedunia, 10 Desember 1996, merupakan dorongan moral, politik, dan organisasi yang sangat besar bagi usaha masyarakat sipil untuk hak penentuan nasib sendiri. Hadiah tersebut diberikan secara terpisah oleh Komite Nobel dan sangat layak diterima dua orang tersebut, Uskup Belo dan José Ramos-Horta, tetapi nominasi terhadap mereka adalah hasil inisiatif masyarakat sipil dan khususnya teman-teman lama Timor-Leste yang bekerja di balik layar di Amerika Serikat. Penghargaan yang bergengsi tersebut mengonfirmasi kebenaran moral usaha masyarakat sipil dan memperlemah tuntutan yang diajukan pemerintah Indonesia dan para pembelanya, termasuk dalam hal sejarah konflik versi Indonesia. Penghargaan tersebut juga membantu secara politis, melalui pembahasan tentang perlunya dilakukan penentuan nasib sendiri

.....
* Pastor Domingos Soares, alias Fr Maubere, adalah salah satu orang yang dilatih Colin Renwick.

untuk menyelesaikan konflik—tujuan utama pembelaan masyarakat sipil selama 20 tahun—dan penetapan masalah hak penentuan nasib sendiri sebagai isu utama.* Hadiah tersebut ibarat bonus bagi organisasi masyarakat sipil. Liputan media global yang terjadi karenanya, dan berlanjut mengiringi perjalanan José Ramos-Horta keliling dunia dalam peran barunya, menghasilkan minat dan dukungan baru dari publik bagi kampanye masyarakat sipil di banyak negara.

492. Akhir kekuasaan Soeharto datang mendadak, dipicu oleh krisis moneter Asia Timur yang melanda hebat seperti tsunami pada Juli 1997, dan mengekspos betapa rawan Orde Baru di balik mistifikasi tentang Orde Baru yang tidak bisa dihancurkan. Bagi Timor-Leste, jatuhnya Soeharto merupakan “keuntungan moral” seperti disebut Bernard Williams.²⁴⁵ Sebagian orang dari kalangan masyarakat sipil mengatakan bahwa perubahan harus dicapai sementara Soeharto masih berkuasa, karena hanya Soeharto yang memiliki kekuasaan untuk memerintah militer.† Yang lain mengatakan bahwa kemerdekaan bergantung pada demokratisasi di Indonesia atau, paling tidak, pada perubahan kepemimpinan. Yeni Rosa Damayanti memberi kesaksian pada Komisi:

Saya mendengar dari para mahasiswa Timor Timur di Jawa, bahwa Xanana sendiri mengatakan kemerdekaan Timor Timur akan bergantung pada proses demokratisasi Indonesia. Akan sulit untuk mencapai kemerdekaan tanpa demokrasi di Indonesia [yang berarti bahwa Soeharto harus jatuh].²⁴⁶

493. Pendapat yang kedua terbukti benar. Soeharto tetap kukuh pada pendiriannya dan hingga detik terakhir ia menolak memberi otonomi terbatas sekalipun pada Timor-Leste. Tekanan masyarakat sipil meningkat. Soeharto menjadi sasaran demonstrasi massa di Vancouver, ketika ia menghadiri KTT Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) pada November 1997.‡ Di dalam negeri, mahasiswa berhasil merebut dukungan yang terus meningkat dari kelas menengah, untuk reformasi total dan mengatur demonstrasi-demonstrasi besar-besaran. Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan kursi presiden ke Wakil Presiden BJ Habibie pada 21 Mei 1998.

* Siaran pers Komite Nobel Norwegia menyatakan: “Komite Nobel akan mendorong usaha untuk mendapatkan solusi diplomatik terhadap konflik Timor-Leste berdasarkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri”. Komite yakin hal itu terjadi. Beberapa tahun kemudian Geir Lundestad, Sekretaris Komite, mengatakan mengenai pemberian hadiah Nobel: “Terlihat beberapa dampak positif yang disebabkan pemberian Hadiah Nobel 1996 kepada Uskup Carlos Belo dan José Ramos-Horta dalam perjuangan untuk membela hak atas menentukan nasib sendiri rakyat Timor-Leste”. (Geir Lundestad, Sekretaris, Komite Nobel Norwegia, “Reflections on the Nobel Peace Prize”, <http://nobelprize.org/peace/articles/undestad>, pada 10 Juni 2004.

† Umur Soeharto yang telah lanjut dan masalah kesehatannya mungkin merupakan faktor pertimbangan dalam pemberian Hadiah Nobel. Di Australia, organisasi-organisasi nonpemerintah bertemu dengan Abdurrachman Wahid, pemimpin Muslim progresif yang kemudian menjadi presiden Indonesia keempat, untuk membicarakan pendekatan terhadap Soeharto oleh David Lange, mantan perdana menteri Selandia Baru. Rencana tersebut didahului oleh berbagai peristiwa.

‡ Selama sepuluh hari sebelum APEC, 13 orang Timor-Leste yang diasingkan dan beberapa orang Indonesia melakukan tur di Kanada mengimbau pihak berwenang untuk “halangi Soeharto atau penjarakan dia” atas kejahatan-kejahatannya di Timor-Leste dan Indonesia.

Tahap kelima: Penentuan nasib sendiri, 1998-99

494. Periode ini menandai babak akhir kekuasaan Indonesia atas Timor-Leste dan saat yang dramatis serta intens bagi semua yang terlibat, termasuk masyarakat sipil. Seperti kedatangannya 24 tahun sebelumnya, kepergian Indonesia penuh kekerasan dan kekacauan. Tapi, kali ini tujuannya, meskipun tidak dalam pelaksanaannya, sesuai dengan kebijakan internasional dan dihargai oleh masyarakat sipil. Indonesia membalik posisinya langkah demi langkah. Pada Juni 1998, Presiden Habibie menawarkan otonomi terbatas di dalam wilayah Indonesia kepada Timor-Leste. Tujuh bulan kemudian, pada Januari 1999, dia menawarkan pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri di bawah supervisi PBB. Pemilihan suara dilakukan pada 30 Agustus 1999 dan menghasilkan pilihan kemerdekaan secara penuh. Pada 20 Oktober 1999, MPR Indonesia mengakui hasil tersebut dan mencabut dekret 1976 yang memasukkan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Pada 1 November 1999, pasukan-pasukan terakhir TNI meninggalkan wilayah Timor-Leste.

495. Awalnya, masyarakat sipil meragukan naiknya BJ Habibie sebagai presiden. Tidak ada yang bisa diharapkan dari seseorang yang dianggap eksentrik dan selama hubungannya yang panjang dan erat dengan Soeharto tidak pernah menunjukkan perhatiannya pada isu Timor-Leste. Ternyata masyarakat sipil sangat diuntungkan dari kekuasaan Habibie yang singkat itu. Ia menerima apa yang selama itu dituntut oleh masyarakat sipil, yaitu tindakan penentuan nasib sendiri yang sejati di Timor-Leste. Secara substansial ia membuka ruang demokrasi, yang memberi kebebasan bagi masyarakat sipil di Indonesia dan Timor-Leste untuk mengatur dan mengampanyekan penentuan nasib sendiri, suatu kesempatan yang sangat mereka manfaatkan.*

496. Pembalikan kebijakan oleh Habibie secara dramatis juga mengubah dinamika sekitar masalah Timor di arena internasional. Pemerintah negara-negara yang sebelumnya mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste dan sangat mendukung Orde Baru, sekarang mengubah kebijakan mereka untuk mendukung penentuan nasib sendiri. Untuk pertama kalinya sejak 1975, pemerintah dan masyarakat sipil—dengan pengecualian Portugal, di mana keduanya telah bersepakat—mengakhiri perselisihan mereka, paling tidak dalam masalah-masalah kebijakan substansial, dan mulai bekerjasama untuk menyokong penentuan nasib sendiri di Timor-Leste dan tidak lagi saling menentang.

497. Digabung dengan akses dan laporan media tentang Timor-Leste seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, perkembangan ini mendorong masyarakat sipil dengan semangat yang baru. Bahkan negara-negara yang sudah sejak lama melibatkan diri dalam masalah ini pun menyaksikan perkembangan yang dramatis dalam hal kadar dan luasnya dukungan publik. Jean Pierre Catry memberitahu

.....
* Habibie melakukan sejumlah reformasi yang secara langsung menguntungkan masyarakat sipil. Dia mengakui kebebasan berkumpul dan pembentukan partai-partai politik, mengurangi pembatasan pers, membebaskan para tahanan politik, dan mengatur penandatanganan atau pengesahan konvensi-konvensi penting hak asasi manusia dan buruh internasional.

Komisi bahwa di Portugal saja tumbuh “ratusan grup dari parlemen ke sekolah-sekolah, kotamadya, jemaah gereja, asosiasi profesional, serikat dagang... tidak mungkin menyebut semuanya.”²⁴⁷ Australia memiliki pengalaman yang sama.[†] Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, mengakui fenomena ini: “Selama saya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri, tidak ada isu kebijakan luar negeri yang mendapat perhatian publik di Australia lebih daripada Timor-Leste...”²⁴⁸ Pemerintah Australia juga mengakui peran masyarakat sipil di dalam negerinya dalam merebut hak penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste, dengan mengundang dua wakil masyarakat sipil bergabung dalam delegasi resmi guna mengamati pemungutan suara Agustus 1999 tersebut.[†]

498. Sebagian besar dari 2.300 orang pengamat pemungutan suara yang disetujui PBB berasal dari kalangan organisasi nonpemerintah. Mengenai peran mereka, Ian Martin mengatakan:

Banyak yang berasal dari kelompok-kelompok solidaritas dengan komitmen pada penentuan nasib sendiri atau kemerdekaan Timor-Leste Tapi, mandat yang mereka terima saat akreditasi mengharuskan mereka bersikap netral.²⁴⁹

499. Sebagian besar para pengamat, sekitar 1.700 orang, adalah orang Indonesia dan Timor-Leste. Dalam suatu tampilan organisasi internasional dan solidaritas yang mengesankan, mereka didukung oleh rekan-rekan dari seluruh dunia, sebagian besar dikoordinasi oleh IFET (International Federation for East Timor, yang berbasis di AS/ETAN), Asian Network for Free Elections (ANFREL) yang berbasis di Thailand, dan Asia-Pacific Coalition for East Timor (APCET) yang berbasis di Filipina. Mereka mewakili banyak warga di banyak negara, yang bagi mereka, sama seperti bagi rakyat Timor-Leste, pemungutan suara itu menjadi klimaks dari suatu perjuangan hebat dan mendemonstrasikan kembali pentingnya serta besarnya kekuatan rakyat dalam menghadapi masalah-masalah global.

Masyarakat sipil Indonesia

500. Masyarakat sipil Indonesia pada 1990-an memasukkan masalah Timor-Leste ke dalam daftar masalah-masalah sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan yang sangat mendesak. Meskipun kecil dan terisolasi, bagian-bagian penting dari gerakan pro-Timor itu langsung menuju inti masalah dan menyatakan pembelaan mereka terhadap hak penentuan nasib sendiri. Orientasi politik ini terjadi berkat pengaruh orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri dan orang-orang Timor-Leste yang belajar di Jawa dan Bali. Pembelaan mereka di Indonesia era Soeharto membutuhkan keberanian yang luarbiasa. Meskipun Konstitusi Indonesia mengharuskan memerangi

* Luasnya minat publik Australia terbukti dari banyaknya kelompok-kelompok masyarakat sipil dan individu yang memberi kesaksian pada penyelidikan tentang Timor-Leste di Parlemen Australia pada 1999.

† Kedua pengamat tersebut adalah Pat Walsh dari ACFOA dan Anne Wigglesworth dari Caritas Australia.

kolonialisme dan menegakkan hak semua bangsa atas kemerdekaan,²⁵⁰ namun dalam pandangan rezim tersebut, mendukung penentuan nasib sendiri di Timor-Leste (setelah 1976) adalah tindak subversi terhadap asas utama persatuan nasional, yang harus menyokong kebijakan negara dan militer. Mereka yang mendukung atau berkolaborasi dengan para pembela Timor diganggu dan berisiko dicap sebagai pengkhianat. Hanya di Timor-Leste sajarah aktivitas-aktivitas seperti itu menjadi lebih berbahaya. Namun dengan keberanian mereka berbicara, grup-grup masyarakat sipil Indonesia mematahkan tabu ketakutan dan kebisuan, dan dengan susah-payah berhasil memobilisasi dukungan. Kegiatan ini memuncak dengan hadirnya ratusan warga Indonesia di samping warga Timor-Leste, ketika rakyat Timor-Leste melaksanakan hak penentuan nasib sendiri pada Agustus 1999.

Tahun-tahun awal

501. Sampai 1990-an, Timor-Leste bukanlah isu penting di kalangan organisasi nonpemerintah di Indonesia, meskipun beberapa tokoh perseorangan dan organisasi sudah aktif sebelum tahun-tahun itu. Bagi sebagian orang, keterlibatan ini merupakan bagian dari tugas profesional mereka yang, meski sering sensitif dan sulit, tidak melibatkan aktivitas politik langsung. Ini termasuk George Aditjondro yang mengunjungi Timor-Leste pada Mei 1974 sebagai koresponden Tempo, dan berbagi informasi dengan kalangan Gereja di luar negeri setelah invasi; tokoh-tokoh perseorangan yang berasosiasi dengan Gereja Protestan, seperti Yopie Lasut, Gustaf Dupe, Asmara Nababan, dan Ade Rostina Sitompul, yang mengurus para tahanan politik Timor-Leste yang ditahan di penjara-penjara Indonesia; para anggota lembaga Gereja Katolik LPPS, Fr. Gerry Zegwaard MSC, Fr. Hardoputranto SJ, dan Immaculata Mardani yang menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Timor-Leste dan merupakan sumber informasi rahasia tentang Timor-Leste bagi orang-orang di luar Indonesia.[†]

502. Sebagian orang Indonesia yang tinggal di luar negeri juga aktif mendukung Timor-Leste sebelum 1990, khususnya di kalangan mereka yang meninggalkan Indonesia untuk menghindari pembersihan PKI setelah Soeharto merebut kekuasaan pada 1965.[‡] Di Eropa, mereka bergabung dengan grup-grup pendukung

* George Aditjondro adalah anggota dari sebuah grup Katolik Indonesia muda yang pada 1974 berusaha memformulasi kebijakan Timor-Leste yang demokratis dan non-militer untuk KWI. Dokumen mereka dapat dibaca sebagai Appendix 1 dalam *East Timor: An Indonesian Intellectual Speaks Out* diedit oleh Herb Feith, Emma Baulch, dan Pat Walsh, ACFOA Mei 1994,. Aditjondro juga dipercaya telah menulis laporan non-pemerintah pertama dari dalam Indonesia setelah invasi dalam bentuk sebuah surat kepada Fr Mark Raper, SJ, yang diterima Asian Bureau Australia pada 21 April 1976. (arsip CAVR)

† LPPS didukung oleh dan melakukan kontak secara reguler dengan agensi-agensis Katolik di seluruh dunia melalui Asia Partnership for Human Development (APHD) yang berbasis di Hong Kong. Meskipun tidak secara langsung relevan dengan catatan ini, harus diakui kontribusi kemanusiaan tidak egois yang dilakukan oleh banyak orang Indonesia pada Timor-Leste selama penjajahan Indonesia. Untuk catatan pengalaman mereka selama pergolakan pada 1999, lihat Yohanes Sukandar, Sigit Wijayanto, Martinus Manggo (ed.), *Selamat Tinggal Timor Timur*, Insist Press, Yogyakarta 2000.

‡ Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai komunis pertama di Asia dan pada 1966 telah menjadi salah-satu yang terbesar. Orde Baru muncul pada 1966 setelah pengambilalihan militer, dicekalnya PKI, dan dilikuidasinya hampir satu juta orang anggotanya dan mereka yang dituduh sebagai pendukungnya.

di Jerman, Prancis, Belgia, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Belanda (Komite Indonesia), tapi umumnya tetap tidak mau diketahui namanya karena sensitifnya isu dan kerawanan mereka sebagai orang politik yang diasingkan. Kusni Sulang aktif di Paris dan Hendrik Amahorseja di Swedia. Di Australia, Siau Tiong Djin, Goei Hok Gie (Andrew Gunawan); dan di Belanda juga Ernst Utrecht. Pada 1981, Jusfik Hadjar dan Liem Soei Liong menjadi orang-orang Indonesia pertama yang secara terbuka menentang invasi dan mendukung kemerdekaan Timor-Leste ketika mereka memberi kesaksian pada Pengadilan Permanen Rakyat di Lisabon. Sebagai balasan, pemerintah Soeharto menyatakan mereka sebagai *persona non grata* dan dicekal untuk kembali ke Indonesia. Orang-orang yang diasingkan lainnya tidak pernah secara terbuka menunjukkan dukungan mereka dan kemudian diperbolehkan kembali ke Indonesia dengan selamat. Sebagian diaspora Indonesia mungkin telah mendukung Timor-Leste untuk memajukan kepentingan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terlarang. Liem Soei Liong menyangkal pekerjaannya atau pekerjaan Carmel Budiardjo di “Tapol” didorong oleh agenda ganda seperti itu.^{*}

503. Diaspora Indonesia di Eropa membantu aktivitas pro-Timor di Indonesia. Mereka menyediakan informasi alternatif tentang Timor-Leste, misalnya dengan mengirim laporan berkala “Tapol” ke Indonesia dan melakukan kunjungan rahasia.[†] Para jurnalis Indonesia yang bekerja di Radio Belanda seperti Tossy Santoso dan Yoss Wibisono menyiarkan berita dan wawancara tentang Timor-Leste yang diterima di Indonesia. Tossy Santoso juga menulis beberapa buku tentang Timor-Leste dalam bahasa Indonesia. Strategi produktif lainnya yang mereka lakukan adalah usaha menghubungkan para aktivis Timor-Leste dengan para aktivis Indonesia dan rekan-rekan internasionalnya. Para aktivis seperti Max Lane di Australia dan António Barbedo de Magalhães di Portugal memiliki jaringan strategi yang sama. Inisiatif internasional ini memberi kontribusi dalam pembentukan dan pengarahannya organisasi nonpemerintah Indonesia seperti Inflight, Solidamor, dan SPRIM (Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere). Orang-orang Indonesia di luar negeri menjadi lebih aktif tentang masalah Timor-Leste pada akhir 1980-an dan pada 1990-an. Dua orang Indonesia yang menetap di Belanda, Aeri Harapan dan Reza Muharram, bergabung dengan kapal protes Portugis *Lusitania Expresso* pada Maret 1992. Sebagai hukuman, paspor mereka berdua dibatalkan oleh pemerintah Indonesia. Yeni Rosa Damayanti juga dibatalkan paspornya setelah partisipasinya dalam sebuah demonstrasi anti-Soeharto pada 1996. Kewarganegaraan mereka hanya dikembalikan setelah Soeharto jatuh.

* Komunikasi ke CAVR, 28 Februari 2005. Dalam sikap sensitif pada saat kesaksian publiknya pada CAVR, Yeni Rosa Damayanti menyertakan aktivis Inggris Carmel Budiardjo dalam daftarnya yang berisi orang-orang Indonesia yang aktif di luar negeri. Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2003, hal. 5. Carmel Budiardjo dipenjara di Indonesia setelah 1965 dan, setelah dibebaskan dan kembali ke Inggris, mengabdikan hidupnya untuk membela hak asasi manusia di Indonesia.

† Liem Soei Liong melakukan beberapa kunjungan rahasia selagi dia dicekal dan pada tiap kesempatan tersebut memberikan ceramah tentang Timor-Leste pada para aktivis Indonesia. Komunikasi ke CAVR, 28 Februari 2005. Aktivis Indonesia Nugroho Katjasungkana mengonfirmasi pengaruh dari para [diaspora] Indonesia pada pekerjaan solidaritas para aktivis Indonesia. Kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri, 15-17 Maret, 2003.

504. Warga Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk bekerja sementara, belajar, atau bepergian ke luar negeri sering dihadapkan pada isu Timor-Leste melalui media atau rekan-rekan mereka. Para pemimpin masyarakat sipil seperti Abdurrachman Wahid, Todung Mulya Lubis, Adnan Buyung Nasution, dan Abdul Hakim Garuda Nusantara terkadang menggunakan kesempatan-kesempatan seperti itu untuk membahas isu tersebut dan bertemu dengan tokoh-tokoh Timor-Leste. Mereka tetap diawasi dan karena tanggungjawabnya di Indonesia mereka tidak berani mengambil risiko berbicara terbuka, karena akan mendapat kesulitan dari pihak yang berwenang, baik bagi mereka sendiri ataupun organisasi mereka.

Tahun 1990-an

505. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat sipil di Indonesia sering membusu tentang Timor-Leste sampai 1990-an. Masyarakat sipil hampir tidak ada di Indonesia di bawah rezim Soeharto. Orde Baru bersistem otoriter, malahan hampir totaliter. Masyarakat sipil tidak memiliki tempat formal dalam struktur politik yang membela kaum korporat dan bertindak dari atas ke bawah, yang melarang hak-hak sipil dan politik dengan alasan persatuan, pembangunan, dan stabilitas nasional. Ketika organisasi masyarakat sipil akhirnya muncul, mereka terlalu disibukkan oleh isu-isu tanah, tenaga kerja, lingkungan dan lainnya, dan hanya memiliki sedikit dari kebebasan dan sumberdaya yang dimiliki organisasi komunitas di negara-negara demokratis.

506. Selain dikucilkan, masyarakat sipil juga dibuat tidak tahu tentang realitas di Timor-Leste. Pemerintah Soeharto membatasi akses ke wilayah tersebut, termasuk untuk media massa Indonesia dan masyarakat sipil, mengontrol dengan ketat informasi tentang Timor-Leste, dan pemerintah hanya mengumumkan versi resmi, yaitu integrasi adalah positif dan telah mengikuti tindakan penentuan nasib sendiri. Dalam kesaksian terbukanya pada Komisi, Yeni Rosa Damayanti bertanya secara retorik: “Di mana rakyat Indonesia ketika rakyat Timor-Leste sedang menderita?” Dia menjawab: “Jawabannya, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini.”²⁵¹

507. Faktor terbesar kedua adalah iklim ketakutan di Indonesia yang diciptakan oleh pengambilalihan oleh militer yang penuh kekerasan pada 1965, dan yang diresmikan secara hukum serta operasional selama pemerintahan Soeharto. Dalam penilaian Liem Soei Liong, “Timor-Leste selalu merupakan isu yang sensitif, dan mungkin pada awal 1980-an merupakan isu yang lebih sensitif dibanding isu PKI/1965.”²⁵² Yeni Rosa Damayanti mengilustrasikan maksud pernyataan ini dalam praktik, ketika dia memberitahu Komisi tentang interogasi seorang Mayor Bakorstanas terhadap dirinya pada 1991 menyusul protes terhadap Perang Teluk, yang dengan gagah-berani dikaitkan oleh para aktivis Indonesia dengan invasi Indonesia ke Timor-Leste. Dia memberi kesaksian:

*Sang Mayor meletakkan pistolnya di hadapan saya dan berkata:
“Kamu boleh bicara tentang apa saja, tapi kamu tidak boleh bicara
tentang Timor Timur. Ribuan tentara telah meninggal di Timor Timur*

dan saya tak akan membiarkan satupun orang Indonesia untuk berbicara tentang Timor Timur. Ribuan orang telah meninggal dan kamu hanyalah satu orang lagi, dan nyawa satu orang Indonesia tidak ada artinya...”²⁵³

508. Nugroho Katjasungkana memberi kesaksian pada Komisi bahwa pada 1980-an orang-orang Indonesia yang tertarik pada pendidikan, kesehatan, dan koperasi alternatif menjadi tertarik pada Timor-Leste ketika mereka mengetahui bahwa Fretilin juga mempunyai perhatian pada bidang-bidang tersebut pada 1975.²⁵⁴ Tapi awal dukungan politik yang berkesinambungan bagi Timor-Leste dimulai pada awal 1990-an oleh organisasi-organisasi seperti Inflight (Saleh Abdullah), Lembaga Pembela Hak-hak Asasi Manusia (HJC Princen⁵), dan Hidup Baru (Yopie Lasut). Selain dari masukan internasional dari orang-orang Indonesia di luar negeri, kontak dengan mahasiswa Timor-Leste yang belajar di Jawa setelah dibukanya provinsi tersebut pada 1989 juga berkontribusi pada kebangkitan ini. Yeni Rosa Damayanti memberitahu Komisi:

Saya dikenalkan pada kasus Timor Timur ketika rekan-rekan mahasiswa Timor Timur yang sekolah di Jawa mulai berdatangan. Ada beberapa orang saat itu, Fernando de Araújo dan lainnya... Mahasiswa-mahasiswa Timor Timur datang ke tempat kami dan di sanalah saya pertama kali mendengar tentang apa yang sedang terjadi di Timor Timur. Bayangkan, setelah bertahun-tahun.²⁵⁵

509. Ini juga menjelaskan mengapa gerakan dukungan lebih kuat di kalangan mahasiswa yang sebagian besar berada di Jawa dan Bali. Seperti di banyak negara lainnya, pembantaian Santa Cruz pada 1991 juga merupakan titik balik bagi banyak pihak di Indonesia. Banyak yang merasa bahwa sifat asli dari negara Indonesia sedang diungkapkan di Timor-Leste dan bahwa sistemnya sendiri sudah salah, bukan hanya aktivitasnya di wilayah tersebut. Para anggota Inflight, LPHAM, dan Hidup Baru bergabung dengan pemuda Timor-Leste untuk memprotes pembantaian tersebut di depan kantor PBB di Jalan Thamrin pada 19 November 1991, yang menyebabkan mereka ditangkap dan diinterogasi. Pada 23 November, menyusul inisiatif oleh Asosiasi Mahasiswa Yogyakarta, 12 Dewan Mahasiswa menandatangani petisi di Bandung untuk menuntut penarikan mundur pasukan-pasukan Indonesia dari Timor-Leste dan memberikan “hak yang penuh dan bebas untuk penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur.”²⁵⁶

510. Pokastim, Kelompok Komunikasi Timor Timur, melakukan koordinasi yang longgar. Bekerja untuk menyediakan bantuan kemanusiaan bagi Timor-Leste, Pokastim menjadi organisasi yang pertama dalam mengadakan pertemuan

* Dilahirkan di Belanda, Haji Princen adalah seorang perintis terkemuka hak asasi manusia di Indonesia sejak waktu perang kemerdekaan, saat dia berperang bersama pihak Indonesia. Dia melindungi banyak orang Timor-Leste, termasuk mereka yang mencari suaka ke luar negeri. Rakyat Timor-Leste mengadakan upacara di Taman Borja da Costa, Dili, untuk menandai kematiannya pada 2002.

publik pertama di Timor-Leste tentang isu penentuan nasib sendiri, yang diadakan di sebuah universitas pada akhir 1997. Grup-grup solidaritas Indonesia Fortilos (Forum Solidaritas Rakyat Timor Lorosae) dan Solidamor (Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Timur) tumbuh dari Forum ini.²⁵⁷ Kedua grup tersebut secara eksplisit mendukung penentuan nasib sendiri. Solidamor memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi di Indonesia, memonitor pemungutan suara Agustus 1999, dan pada bulan tersebut juga menjadi kantor penghubung di Jakarta untuk Resistansi Timor-Leste (CNRT). Pada Mei 2000, sekitar 50 orang Timor-Leste prointegrasi menyerang kantor Solidamor, mencuri berkas-berkas dan uang, serta mencederai beberapa aktivis termasuk Bonar Tigor (Coki) Naipospos, ketua Solidamor. Yang berwenang tidak berbuat banyak untuk menanggapinya.

511. Kelompok-kelompok pro-Timor bertujuan memberi informasi dan memobilisasi para aktivis muda dengan menerbitkan informasi alternatif tentang Timor-Leste. Contoh-contoh awal termasuk wawancara Robert Domm dengan Xanana Gusmão dan *East Timor: Indonesian Occupation and Genocide* (Timor Timur: Pendudukan Indonesia dan Genosida) oleh Profesor Barbedo de Magalhães. Pijar menerbitkan laporan Pelapor Khusus PBB Bacre Waky Ndiaye pada 1995, wawancara Michele Turner dengan para pengungsi Timor-Leste yang diberi judul *Telling East Timor: Personal Testimonies 1942 – 1992*, dan pembelaan pemimpin klandestin Renetil, Fernando de Araújo. Di Salatiga, Geni (Gemi Nastiti Foundation) menerbitkan artikel-artikel kritis mengenai perkembangan Timor-Leste dan demonstrasi anti-Uskup Belo di Jawa. Di Semarang, para mahasiswa Universitas Diponegoro menerbitkan pembelaan Xanana Gusmão dan kritik George Aditjondro terhadap penjajahan Indonesia atas Timor-Leste.

512. Para aktivis Timor-Leste dan Indonesia juga terlibat dalam tindakan langsung gabungan, khususnya melalui SPRIM (Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere), bagian dari Partai Rakyat Demokratik (PRD). Para anggota PRD, yang juga terdiri atas para mahasiswa, pekerja, petani, dan artis, selalu menyertakan tuntutan partai atas referendum di Timor-Leste selain advokasi mereka untuk upah minimal, pemilu yang bersih, dan presiden baru. SPRIM mengadakan rapat-rapat umum dan pada 1995 bergabung dengan beberapa orang Timor-Leste untuk menduduki Kedutaan Belanda dan Rusia di Jakarta.

513. Para aktivis Indonesia juga berhubungan dengan organisasi-organisasi yang sehaluan di wilayah Asia-Pasifik. Pemimpin Pijar, Rachlan Nashidik dan Tri Agus Susanto Siswowiharjo, menghadiri konferensi APCET pertama yang diadakan di Manila pada 1994. Orang-orang Indonesia juga hadir di APCET II di Kuala Lumpur pada 1995 dan APCET III di Bangkok pada 1998. Hubungan dengan Australia juga dipertahankan melalui jaringan beragam, termasuk Action in Solidarity with Indonesia and East Timor (ASIET) dan Indonesia Australia Program for Cooperation

* Pada 1986 Solidamor menerjemahkan dan menerbitkan *Funu: The Unfinished Saga of East Timor* karya José Ramos-Horta. Kampanye yang kreatif dari Solidamor untuk Timor juga termasuk penerbitan buku saku *Mengenal Timor Timur Dulu dan Sekarang*, Solidamor, Jakarta, September 1998.

with Indonesia (IAPC).^{*} Majalah triwulan Australia, *Inside Indonesia*, yang dibentuk pada 1983, adalah media pertukaran informasi yang dihormati dan menjadi sumber informasi alternatif satu lagi tentang Timor-Leste untuk para pembaca Indonesia.

514. Organisasi nonpemerintah lain menyediakan bantuan hukum dan perawatan penyantunan bagi para tahanan politik Timor-Leste yang telah ditahan di Timor-Leste dan Indonesia karena mempromosikan hak penentuan nasib sendiri. Ketika sejumlah besar orang Timor ditahan setelah pembantaian Santa Cruz pada 1991, para pengacara Indonesia dan lainnya pergi ke Timor-Leste untuk membantu mereka dalam pembelaan hukum. Ade Rostina Sitompul memberi kesaksian pada Komisi tentang risiko pribadi yang mereka hadapi untuk membantu para tahanan Timor di Dili saat itu:

Itu bukanlah pekerjaan yang mudah karena aparat keamanan sangat represif dan kita selalu dibuntuti ke manapun kita pergi... Para pengacara, seperti Pak Luhut [Pangaribuan], diteror di Hotel Turismo... Kita menerima panggilan-panggilan telepon yang menyuruh kita pulang atau akan dibunuh dan saya takut sekali waktu itu.²⁵⁸

515. Elsam dan lembaga-lembaga keadilan sosial dari Gereja Protestan (PGI) dan Katolik (KWI) mendirikan Joint Committee for the Defence of the East Timorese (JCDET – Komite Gabungan untuk Membela Timor Timur). Fungsinya adalah menyediakan bantuan hukum, membantu keluarga para tahanan di Timor-Leste, dan mencarikan dana bagi para mahasiswa Timor-Leste yang, karena aktivitas politik mereka, telah kehilangan beasiswa dari pemerintah. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mewakili José António Neves pada pengadilannya 1994-1995 dan mengatakan bahwa pengadilan tersebut tidak sah karena Timor-Leste belum menjalankan haknya atas penentuan nasib sendiri.

516. Pada 1994, Ade Rostina Sitompul terpaksa meninggalkan Indonesia selama enam bulan agar tidak tertangkap.

517. Pengalaman George Aditjondro menggambarkan lebih jauh tentang akibat dari penentangan kebijakan Indonesia atas Timor-Leste. Pada 1994, setelah sebuah surat kabar asal Australia menerbitkan laporan-laporannya mengenai Timor-Leste, Aditjondro dicap sebagai “pengkhianat” oleh tokoh-tokoh pemerintah dan rumahnya di Salatiga dilempari batu. Ia terpaksa meninggalkan Indonesia pada 1995 untuk periode yang panjang.[†]

.....
^{*} IAPC didirikan oleh Australian Council for Overseas Aid (ACFOA, sekarang ACFID) untuk menumbuhkan hubungan rakyat ke rakyat antara Indonesia dan Australia, dan sebagian juga untuk membalik persepsi di Indonesia yang menganggap bahwa LSM Australia terlalu berfokus ke Timor-Leste. Kontribusinya pada International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan organisasi Indonesia lainnya memungkinkannya mengangkat Timor-Leste dalam lingkungan yang lebih positif. Pada 1992, sekretarisnya, Pat Walsh, diusir dari Indonesia dan dicekal selama beberapa tahun setelah namanya disebut dalam pengadilan pembantaian Dili.

[†] Alasan utama Aditjondro pergi adalah untuk menghindari pengadilan politik karena artikel-artikel yang ia tulis tentang bisnis yang berhubungan dengan Soeharto, tetapi pandangan-pandangannya ten-

518. Para pendukung Timor-Leste dari Indonesia tidak hanya harus menghadapi pihak militer dan pemerintah yang tidak bersahabat. Banyak pihak dalam masyarakat sipil arus utama, termasuk orang-orang Kristen, Muslim, dan profesional kelas menengah, juga tidak setuju dengan mereka dan mendukung pendirian resmi tentang Timor-Leste. Apapun alasan mereka, banyak orang Indonesia dari kalangan ini mempunyai kekhawatiran yang sama, bahwa Indonesia akan pecah seperti Yugoslavia dan Uni Soviet jika Timor-Leste diperbolehkan memilih keluar dari Republik Indonesia. Pandangan ini juga ada dalam beberapa gerakan demokrasi yang, sementara setuju dengan imbauan aktivis untuk reformasi luas, mendesak pendukung Timor-Leste dari Indonesia dan rekan-rekannya di Timor-Leste untuk meninggalkan cita-cita kemerdekaan dan bekerjasama dengan mereka untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu demokrasi untuk semua. Itu semua merupakan argumen yang kuat. Namun, para aktivis Timor-Leste tidak pernah sekali pun mengancam keamanan Indonesia, integritas nasional Indonesia, atau mencoba ikut campur dalam urusan internal Indonesia. Mereka tetap berfokus pada perjuangan mereka sendiri.

519. Sejak pertengahan 1990-an, beberapa tokoh prodemokrasi dan organisasi bergabung dengan generasi yang lebih muda dalam mendukung Timor-Leste. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)—sebuah koalisi lebih daripada 100 organisasi nonpemerintah Indonesia dan internasional—mengomentari tentang “munculnya makin banyak suara dalam gerakan demokratisasi di Indonesia untuk penyelesaian damai dari konflik Timor Timur.”²⁵⁹ Mereka yang berbicara termasuk editor *Tempo*, Goenawan Mohamad; ahli pendidikan Katolik, Romo Y.B. Mangunwijaya; pemimpin serikat buruh, Mochtar Pakpahan; dan pembangkang Islam terkemuka, Sri Bintang Pamungkas, yang masing-masing mendukung penentuan nasib sendiri.

520. Beberapa tokoh masyarakat juga menentang kebijakan pemerintah, termasuk pemimpin dua organisasi Muslim terbesar di Indonesia. Pada 1996, ketua Muhammadiyah, Amien Rais, menyatakan secara terbuka bahwa Timor-Leste sebaiknya dibiarkan berpisah dari Indonesia, jika memang itu kehendak rakyatnya. Ia memberitahu pers Australia bahwa ia percaya pemerintah Indonesia telah berusaha yang terbaik, “tapi jika rakyat Timor Timur tetap menginginkan referendum dan menginginkan negara merdeka, saya pikir lebih baik untuk mengucapkan selamat tinggal. Jika hasil referendum memang benar, berarti kita tidak boleh bertahan pada posisi kita. Biarkan mereka bebas.”²⁶⁰ Abdurrachman Wahid alias Gus Dur, pemimpin Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, membuat banyak pernyataan terbuka, dan lebih terus terang, tentang perlunya menyelesaikan masalah Timor-Leste. Dengan dukungan Gus Dur, INFID terus-menerus membuat pernyataan tentang Timor-Leste dalam resolusi setiap konferensi yang diselenggarakannya. Dengan alasan bahwa hak asasi manusia dan demokratisasi sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, INFID menentang ‘pendekatan keamanan’ secara militer dan mengimbau komunitas internasional

.....
tang Timor-Leste juga mempersulit hubungannya dengan rezim Soeharto (Herb Feith, Emma Baulch, and Pat Walsh (ed.), *East Timor: An Indonesian Intellectual Speaks Out*).

untuk menghentikan segala bentuk bantuan militer sebelum TNI berada di bawah kontrol kekuasaan sipil. INFID juga mengimbau komunitas internasional supaya “mendukung dilakukannya pengadilan internasional untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan kejahatan perang yang dilakukan anggota militer Indonesia di Timor-Leste”²⁶¹ setelah kekerasan pasca-pemungutan suara 1999.

521. Yeni Rosa Damayanti memberi kesaksian pada Komisi tentang euforia yang melanda kalangan masyarakat sipil Indonesia menyusul jatuhnya Soeharto pada Mei 1998. Dalam beberapa bulan berikutnya, para aktivis Indonesia mengunjungi Timor-Leste secara bebas dan meningkatkan kampanye publiknya. “Kami tidak lagi berbicara tentang Timor-Leste dalam ruang-ruang tertutup.”²⁶² Walaupun demikian, sebagian besar warisan Orde Baru tetap hidup, dan Yeni Rosa Damayanti serta Nugroho Katjasungkana memberi kesaksian bahwa organisasi-organisasi nonpemerintah Indonesia, berdasarkan pengalaman penindasan di tangan aparat keamanan selama bertahun-tahun, sangat terkejut ketika PBB menyerahkan soal keamanan kepada militer dan polisi Indonesia pada 1999. Pada April 1999, sebagai contoh, kelompok-kelompok pendukung Indonesia terpaksa menyembunyikan teman-teman Timor-Leste di rumah-rumah aman, ketika Kopassus membawa 150 orang milisi prointegrasi ke Jakarta untuk mencari orang-orang yang berkampanye untuk penentuan nasib sendiri.²⁶³

522. Meski ada ketidakpercayaan terhadap TNI, dan juga karena itu, sekitar 600 anggota masyarakat sipil Indonesia mengunjungi Timor-Leste pada Agustus 1999 untuk mengamati jalannya pemungutan suara. Dikoordinasi oleh Kiper* (Komite Independen Pemantau Suara), mereka membentuk grup pengamat eksternal terbesar dan menolak klaim Indonesia yang mengatakan bahwa PBB telah memanipulasi jumlah suara. Dengan kehadirannya, mereka menawarkan perlindungan bagi para pemilih Timor-Leste dan membantu memfasilitasi tindakan penentuan nasib sendiri yang bersejarah tersebut. Sebagai orang Indonesia, mereka telah menyumbangkan segala kemungkinan untuk melawan. Presiden Habibie bukanlah orang Indonesia pertama yang bicara tentang referendum bagi Timor-Leste dan diapun tidak mendengarnya pertama kali dari Perdana Menteri Australia John Howard. Masyarakat sipil Indonesia telah membela ide tersebut jauh-jauh hari sebelum 1999.

Kesimpulan

523. Ian Martin, pemimpin UNAMET yang bertugas menjamin rakyat Timor-Leste menjalankan haknya untuk penentuan nasib sendiri, menulis bahwa:

Peran hebat yang dilakukan organisasi nonpemerintah dan beberapa tokoh individu yang tetap menaruh kekhawatiran atas nasib Timor-Leste ketika dunia diplomatik sangat tidak menaruh perhatian, adalah kisah yang memiliki pelajaran-pelajaran penting...²⁶⁴

* Kiper diketuai oleh Bonar Tigor Naipospos. Para anggota dewan termasuk Lukman Soetrisno, Abdurrahman Wahid, Arief Budiman, Saparinah Sadli, dan George Aditjondro.

524. Pandangan ini disetujui secara luas. Sebagian besar pekerjaan dalam gerakan solidaritas dilakukan dengan risiko menghadapi sikap tidak bersahabat pemerintah dan para pemegang kekuasaan lainnya. Begitu pun di negara-negara kaya, sebagian besar organisasi solidaritas dan individu berjuang untuk memperoleh dana dan sumberdaya, justru ketika banyak orang menganggap Timor-Leste hanya isu marginal. Sebagian besar usaha tersebut dilakukan oleh para individu dengan mengorbankan waktu dan kehidupan pribadi mereka, demi perjuangan Timor-Leste. Ini semua merupakan proses perjuangan, tapi juga proses berbagi dan belajar, untuk meraih rakyat Timor yang ada di dalam negeri dan diasporanya, serta merupakan proses pembangunan kemitraan dan persahabatan antarkelompok di dalam dan di luar negeri.

525. Pada 23 Mei 2002, tiga hari setelah perayaan kemerdekaan Timor-Leste, sekumpulan orang dipanggil rapat di Dili untuk menghormati solidaritas internasional. Tiga pemimpin Timor-Leste yang baru disumpah, Presiden Kay Rala Xanana Gusmão, Perdana Menteri Mari Alkatiri, dan Menteri Senior Urusan dan Kerjasama Luar Negeri José Ramos-Horta, menggunakan kesempatan tersebut untuk memberi pujian pada semua individu dan grup yang mendukung perjuangan Timor-Leste. Beberapa hari sebelumnya, di Taman Rakyat Internasional di tepi laut Lecidere, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan memberitahu sekelompok orang yang dikumpulkan oleh program United Nations Volunteer: “tanpa kerja para anggota UNV, Timor-Leste tidak akan pulih dari kehancuran; tanpa tindakan-tindakan solidaritas internasional, Timor-Leste tidak akan dapat mencapai kemerdekaan.” Sebuah piagam di tempat tersebut mencantumkan kata-kata berikut dari José Ramos-Horta, penerima Nobel Perdamaian: “Kami tidak akan pernah melupakan Anda, teman-teman abadi kami.”²⁶⁵

526. Komisi yakin bahwa pelajaran-pelajaran berikut dapat dipetik dari pengalaman ini:

- Kontribusi masyarakat sipil untuk penyelesaian masalah Timor-Leste hanya mungkin karena adanya masyarakat sipil dan diperbolehkannya mereka bergerak bebas sebagai sektor independen di berbagai belahan dunia; atau karena, seperti di Indonesia dan Timor-Leste sendiri, masyarakat sipil mewajibkan diri melawan penindasan. Pengalaman Timor-Leste menunjukkan bahwa masyarakat sipil yang kuat sangat penting bagi berfungsinya setiap masyarakat dan komunitas internasional.
- Selama dua puluh lima tahun perjuangan, kemitraan yang kuat ditempa antara para pemimpin Timor-Leste sekarang dengan masyarakat sipil internasional, yang jarang ditemukan dalam sejarah pembangunan bangsa. Kemitraan ini, yang sekarang memasuki tahap baru, sebaiknya dijunjung tinggi oleh kedua pihak karena merupakan aset jangka panjang yang penting bagi Timor-Leste.
- Dari pengalaman Timor-Leste, masyarakat sipil memetik pelajaran bahwa, selain harus strategis, mereka sangat efektif ketika (a) bertahan pada prinsip; (b) tak memiliki kepentingan politis; (c) tidak menggunakan kekerasan; (d) terbuka pada kontribusi semua orang; dan (e) independen tapi siap bekerjasama dengan kalangan pemerintah dan bisnis bila memungkinkan.

Temuan-temuan

Komunitas internasional

527. Komisi menemukan bahwa:

1. Pengakuan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Timor-Leste adalah wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri yang memiliki hak atas penentuan nasib sendiri, merupakan hal yang fundamental bagi nasib Timor-Leste sebagai bangsa yang kecil dan rentan. Hal ini memberi dasar hukum internasional bagi masalah tersebut, yang menjadi aset utama bangsa Timor-Leste dalam perjuangan mereka menuju kemerdekaan.
2. Rasa hormat negara-negara anggota terhadap sistem hukum internasional dan peran PBB merupakan hal yang penting bagi hubungan internasional yang baik dan penegakan perdamaian dan keadilan, terutama bagi golongan minoritas. Bangsa Timor-Leste tahu, dari pengalamannya, bahwa kegagalan negara-negara anggota untuk menghormati prinsip-prinsip internasional memiliki konsekuensi yang amat pahit, tetapi juga bahwa PBB yang berfungsi dengan baik akan dapat menguntungkan semua.
3. Sebagian besar anggota PBB gagal mendukung Timor-Leste dalam Sidang Umum dari 1976 sampai 1982, baik dengan memberi suara menentang resolusi-resolusi untuk Timor-Leste maupun dengan tidak memberi suara samasekali. Sampai ketika diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB di 1982, masalah Timor-Leste hanya dapat dipertahankan di PBB oleh sepertiga dari komunitas dunia. Sebagian besar negara-negara ini adalah negara Dunia Ketiga atau sosialis. Hanya empat negara Barat yang mendukung Timor-Leste di PBB sepanjang periode ini, yakni: Siprus, Yunani, Islandia, dan Portugal.
4. Sebagian besar negara-negara Barat gagal menyeimbangkan dukungan bagi prinsip penentuan nasib sendiri dan kepentingan strategis dan ekonomi mereka yang terkait dengan Indonesia. Pada 1975 mereka jelas lebih mementingkan kepentingan mereka dengan Indonesia, dan hanya di permukaan menghormati penentuan nasib sendiri.
5. Masyarakat sipil memainkan peran penting dengan menegakkan prinsip-prinsip internasional di banyak negara, termasuk Portugal dan Indonesia. Masyarakat sipil mendorong hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, memberikan dukungan moral, politik, dan keuangan bagi perjuangan Timor, dan menentang pengabaian atau sikap permusuhan pemerintah negara-negara di dunia terhadap Timor-Leste. Penghormatan kepada hak-hak sipil dan politik serta berfungsinya suatu masyarakat sipil yang kuat sangat penting bagi berfungsinya setiap komunitas dan sistem internasional.
6. Timor-Leste memperoleh keuntungan dari kerja para pejabat dan badan penting PBB, termasuk Sekretaris Jenderal dan Perwakilan Khusus atau

Pribadi yang mereka tunjuk, staf dalam Sekretariat yang tanggung jawab atas isu tersebut, Komite Khusus Dekolonisasi, Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia, dan Sub-Komite Perlindungan Golongan Minoritas.

7. Dewan Keamanan mengakui hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri pada 1975 dan 1976, namun gagal menegakkan hak ini secara efektif hingga 1999. Dewan Keamanan tidak melakukan intervensi untuk menghentikan invasi Indonesia, walaupun sekurangnya dua dari anggotanya mengetahui maksud Indonesia; Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa dan perlunya menghindari pertumpahan darah selanjutnya, tetapi tidak memberi bantuan kemanusiaan darurat; Dewan Keamanan tidak memberikan sanksi kepada Indonesia atas kegagalan Indonesia memenuhi kehendak Dewan Keamanan; Dewan Keamanan tidak menindaklanjuti Resolusi 389 dan menanggukkan masalah ini hingga 1999. Kegagalan ini merupakan tanggungjawab Anggota Tetap Dewan Keamanan yang semuanya, kecuali Cina, bersikap menyepelekan masalah Timor dan memilih melindungi Indonesia dari reaksi internasional di atas kerugian Timor.
8. Amerika Serikat mengakui bahwa bangsa Timor-Leste memiliki hak atas penentuan nasib sendiri tetapi tidak mendukung satupun resolusi Sidang Umum mengenai isu tersebut antara 1975 dan 1982, atau memberi bantuan apapun untuk perjuangan Timor untuk penentuan nasib sendiri hingga 1998. Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan dan negara adikuasa, Amerika Serikat memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mencegah campurtangan militer Indonesia, tetapi menolak melakukan hal itu. Amerika Serikat menyetujui invasi itu dan membiarkan Indonesia menggunakan peralatan militernya meski menyadari bahwa itu melanggar hukum Amerika Serikat sendiri dan akan digunakan untuk menekan hak atas penentuan nasib sendiri. Amerika terus memberi dukungan militer, ekonomi, dan politik kepada Indonesia, walaupun resolusi-resolusi Dewan Keamanan meminta Indonesia mundur dan memperkenankan pelaksanaan penentuan nasib sendiri secara bebas.
9. Prancis dan Inggris mengakui hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. Tetapi, walaupun mereka Anggota Tetap Dewan Keamanan, memilih tinggal diam mengenai isu tersebut. Kedua negara itu bersikap abstain dalam semua resolusi Sidang Umum antara 1975 dan 1982, serta gagal dalam mengampanyekan hak tersebut atau dalam memberi bantuan kepada perjuangan rakyat Timor hingga 1998. Kedua negara itu justru meningkatkan bantuan, perdagangan, serta kerjasama militer mereka dengan Indonesia selama pendudukan. Beberapa peralatan militer Prancis dan Inggris digunakan oleh pasukan Indonesia di Timor-Leste.
10. Cina dan Uni Soviet mendukung resolusi Dewan Keamanan dan Sidang Umum atas isu tersebut antara 1975 dan 1982 (dengan Cina sebagai pengecualian di 1979). Indonesia dengan gegabah menyatakan bahwa kedua negara itu bersekutu dengan Fretilin dan mempunyai kepentingan strategis

di Timor-Leste, serta memanfaatkannya untuk membenarkan campurtangan militer. Kenyataannya, kedua negara itu memberi prioritas besar kepada Indonesia dan hanya menaruh sedikit perhatian pada nasib Timor, dengan perkecualian dukungan awal oleh Cina.

11. Jepang mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan tidak mengakui pengambilalihan oleh Indonesia, juga tidak memberi bantuan militer kepada Indonesia. Meskipun demikian, Jepang mendukung hanya satu resolusi Dewan Keamanan dan menentang semua resolusi Sidang Umum antara 1975 dan 1982. Jepang adalah investor dan donor bantuan terbesar bagi Indonesia, serta memiliki kapasitas lebih banyak daripada negara-negara Asia lainnya untuk memengaruhi penyusunan kebijakan di Jakarta, tetapi Jepang tidak menggunakan pengaruh ini atas nama Timor-Leste.
12. Vatikan mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan, konsisten dengan kebijakan ini, Vatikan tidak menggabungkan Gereja Katolik setempat ke dalam Gereja Indonesia, walaupun ada tekanan dari Indonesia untuk melakukan hal tersebut. Paus Yohanes Paulus II adalah satu-satunya pemimpin dunia yang mengunjungi wilayah Timor-Leste selama masa pendudukan. Para pemimpin Gereja di Timor-Leste secara berkala meminta Vatikan mendukung permintaan mereka untuk penentuan nasib sendiri. Tetapi Vatikan, yang berkepentingan melindungi Gereja Katolik di Indonesia yang mayoritas Muslim, tetap bungkam di depan umum mengenai masalah tersebut dan mencegah pihak-pihak lain di Gereja membicarakan isu tersebut.

Pemangku kepentingan utama

528. Komisi menemukan bahwa:

1. Diplomasi pihak Resistansi Timor-Leste merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai penentuan nasib sendiri. Resistansi mempertahankan komitmennya dalam menghadapi tantangan-tantangan luarbiasa, termasuk perpecahan yang cukup berarti, keterbatasan sumberdaya, isolasi, dan besarnya kendala yang dihadapi di dalam dan di luar Timor-Leste. Diplomasi pihak resistansi pada akhirnya berhasil karena berfokus pada prinsip-prinsip yang disetujui secara internasional, menghindari penggunaan ideologi dan kekerasan, terbuka bagi kontribusi semua orang Timor, dan menggunakan secara maksimal jaringan internasional, media massa, dan jaringan-jaringan masyarakat sipil. Lebih cenderung sebagai isu hak-hak asasi manusia dan moral ketimbang isu ideologi, masalah Timor-Leste memperoleh legitimasi dan dukungan internasional dan mulai tidak menguntungkan Indonesia, yang menyandarkan penyelesaian masalah pada kekuatan dan tanpa dasar hukum internasional atau moralitas.
2. Republik Indonesia di bawah Presiden Soeharto melanggar hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. Tanggungjawab atas pelanggaran

ini terletak terutama pada Presiden Soeharto, tetapi ditanggung bersama-sama oleh pasukan-pasukan bersenjata Indonesia, lembaga-lembaga intelijen, dan CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang secara prinsipil tanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaannya.

3. Presiden Soeharto dan para penasihatnya memutuskan menggabungkan Timor Portugis pada 1974, dengan menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan itu. Cara-cara itu meliputi jalan propaganda, intimidasi, subversi, campurtangan urusan dalam negeri Timor Portugis, penggunaan kekuatan, dan pendudukan militer.
4. Majelis Rakyat Timor Timur yang bersidang di Dili pada 31 Mei 1976 tidak memenuhi syarat internasional untuk tindakan penentuan nasib sendiri yang murni. Sidang ini tidak representatif dan tidak pula merupakan proses yang terbuka dan demokratis. Timor ketika itu tengah berada dalam cengkeraman pendudukan militer dan konflik bersenjata, dan masih belum sampai pada taraf pemerintahan sendiri, dengan lembaga-lembaga politik yang bebas yang akan memungkinkan rakyatnya menentukan pilihan yang sesungguhnya. Proses itu hanya memberi satu pilihan dan karenanya ditolak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Militer Indonesia secara paksa menekan perjuangan penentuan nasib sendiri di Timor-Leste, dan lembaga-lembaga pemerintah Indonesia berusaha menetralkan para pendukung dari masyarakat sipil Timor, Indonesia, serta internasional terhadap penentuan nasib sendiri.
6. Bangsa Indonesia tidak memikul tanggungjawab atas pelanggaran ini. Masyarakat sipil Indonesia menunjukkan keberanian yang luarbiasa, dengan secara aktif mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri.
7. Menyusul perubahan kebijakan Indonesia oleh Presiden Habibie, tindakan penentuan nasib sendiri yang sesungguhnya diadakan di Timor-Leste pada 1999, walaupun militer Indonesia berusaha menggagalkan aksi tersebut dengan menggunakan kekerasan.
8. Republik Portugal di bawah perintah rezim Salazar-Caetano melanggar hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dengan tidak mengakui status wilayah itu sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, dan dengan tidak mempersiapkan rakyat Timor menjalankan pemerintahan sendiri sesuai dengan persyaratan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kegagalan ini merugikan hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, dengan turut menyebarkan pendirian bahwa Timor-Leste yang merdeka tidak akan mungkin bertahan secara ekonomi ataupun politik dan bahwa Timor-Leste hanya dapat hidup melalui penggabungan dengan Indonesia.
9. Keputusan yang diambil Portugal pada 1974 untuk mengakui hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri merupakan peristiwa bersejarah yang mengubah nasib Timor. Meskipun demikian, Portugal gagal menjalankan tanggungjawabnya selama masa penting ini dan meninggalkan

Timor-Leste dalam keadaan relatif tidak berdaya, baik di lapangan maupun secara internasional dalam menghadapi rencana-rencana Indonesia untuk menggabungkan wilayah tersebut.

10. Sebagai kuasa pemerintahan, Portugal setia kepada prinsip penentuan nasib sendiri sepanjang pendudukan Indonesia, serta memberi bantuan keuangan dan politik kepada bangsa Timor-Leste dalam perjuangan mereka untuk penentuan nasib sendiri. Meskipun demikian, diplomasi Portugis tidak menandingi diplomasi Indonesia dan tidak mengampunahkan penentuan nasib sendiri dengan cukup kuat atau konsisten, hampir di sepanjang masa pendudukan Indonesia.
11. Masyarakat sipil Portugis secara aktif mendukung hak bangsa Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, terutama melalui pembelaan di dalam dan luar negeri, dan terus melakukan penyebaran informasi.
12. Australia ada pada posisi yang sangat baik untuk memengaruhi penyusunan kebijakan mengenai isu tersebut; karena baik bangsa Timor-Leste, Presiden Soeharto, maupun komunitas internasional memandang penting pandangan Australia tentang masalah ini. Australia memberi peringatan menentang penggunaan kekuatan pada 1975, namun juga memberi kesan kepada Indonesia bahwa Australia tidak akan menentang rencana penggabungan Indonesia. Australia tidak menggunakan pengaruh internasionalnya untuk menghalangi invasi dan untuk menghindarkan Timor-Leste dari akibat-akibat kemanusiaannya yang dapat diduga akan terjadi. Australia mengakui hak atas penentuan nasib sendiri, tetapi pada praktiknya melemahkannya dengan menerima rencana Indonesia untuk menggabungkan wilayah tersebut, menentang kemerdekaan Timor-Leste dan menentang Fretilin, serta memberi pengakuan *de jure* kepada pengambilalihan oleh Indonesia. Australia hanya mendukung satu resolusi Sidang Umum atas masalah tersebut antara 1975 dan 1982, memberi bantuan ekonomi dan militer kepada Indonesia, serta bekerja keras untuk mendapat dukungan publik Australia dan komunitas internasional untuk keuntungan posisi Indonesia.
13. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota-anggotanya dengan tegas mendukung tindakan penentuan nasib sendiri yang dilaksanakan pada 1999.

Lampiran: Perilaku dalam pengambilan suara atas resolusi mengenai Timor-Leste di Sidang Umum PBB

Tabel A: Resolusi Sidang Umum dan bagaimana negara memberikan suara antara 1975 - 1982

| 1974 - 1999 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Afghanistan | A | A | A | Y | Y | Y | Y | Y |
| Afrika Selatan | NP |
| Afrika Tengah, Republik | NP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A |
| Albania | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Aljazair | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Amerika Serikat | A | T | T | T | T | T | T | T |
| Angola | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Antigua dan Barbuda | - | - | - | - | - | - | NP | T |
| Arab Libia, Republik | NP |
| Arab Syria, Republik | A | A | T | T | T | T | T | T |
| Argentina | A | A | A | A | A | T | T | T |
| Australia | Y | A | A | T | T | T | T | T |
| Austria | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bahama | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bahrain | Y | A | A | A | A | A | T | T |
| Bangladesh | Y | T | T | T | T | T | T | T |
| Barbados | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Belanda | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Belgia | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Belize | - | - | - | - | - | - | Y | Y |
| Belorus SSR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Benin | T | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|---|---|----|----|----|----|----|
| Bhutan | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bolivia | Y | A | A | A | A | T | T | A |
| Botswana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A |
| Brasil | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bulgaria | Y | Y | Y | Y | NP | NP | NP | NP |
| Burundi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Cap Verde | NP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Chad | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | T |
| Cile | A | T | T | T | T | T | T | T |
| Cina | Y | Y | Y | Y | T | Y | Y | Y |
| Czechoslovakia | Y | Y | Y | Y | A | A | A | A |
| Denmark | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Djibouti | - | - | A | NP | NP | NP | NP | NP |
| Dominika | - | - | - | - | NP | NP | NP | A |
| Dominika, Republik | NP | A | A | A | A | A | T | A |
| Ekuador | Y | Y | Y | A | NP | A | Y | NP |
| El Salvador | Y | A | A | A | A | T | T | T |
| Equatorial Guinea | Y | Y | Y | NP | Y | Y | A | NP |
| Etiopia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Fiji | Y | A | A | A | A | A | A | T |
| Filipina | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Finlandia | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Gabon | Y | Y | Y | A | A | A | A | A |
| Gambia | Y | Y | Y | Y | Y | NP | T | T |
| Ghana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y |
| Grenada | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Guatemala | A | A | A | A | A | NP | T | T |
| Guinea | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Guinea-Bissau | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Guyana | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Haiti | Y | A | Y | Y | Y | Y | Y | A |
| Honduras | NP | A | A | A | T | T | T | T |
| Hungaria | Y | Y | Y | Y | A | A | A | A |
| Islandia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| India | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Indonesia | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Inggris Raya | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Iran | T | T | T | T | Y | Y | Y | NP |
| Irak | A | A | T | T | T | T | T | T |
| Irlandia | A | A | A | A | A | A | A | Y |
| Israel | A | A | NP | A | A | A | A | A |
| Italia | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Jamaika | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A |
| Jepang | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Jerman, Republik Demokrasi | Y | Y | Y | Y | NP | NP | NP | NP |
| Jerman, Republik Federal | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kamboja | NP | Y | NP | A | NP | T | T | T |
| Kamerun, Republik Persatuan | Y | Y | Y | Y | A | A | A | A |
| Kanada | A | A | A | A | Y | T | T | T |
| Kenya | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kolombia | A | Y | A | A | T | T | T | A |
| Komoro | NP | NP | Y | NP | NP | NP | T | NP |
| Kongo | NP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kosta Rika | A | A | A | NP | Y | A | NP | A |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Kuba | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Kuwait | Y | A | A | A | A | NP | T | T |
| Laos, Republik Demokrasi Rakyat | Y | Y | Y | A | Y | Y | NP | Y |
| Lebanon | NP | A | A | A | A | NP | NP | A |
| Lesotho | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y |
| Liberia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | T |
| Luksemburg | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Madagaskar | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Malawi | Y | Y | A | Y | Y | Y | Y | Y |
| Malaysia | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Maladewa | NP | A | T | T | T | T | T | T |
| Mali | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Malta | NP |
| Maroko | A | T | T | T | A | A | A | T |
| Mauritania | A | T | T | T | A | A | A | A |
| Mauritius | A | Y | NP | Y | NP | A | NP | Y |
| Meksiko | Y | Y | Y | Y | Y | NP | Y | Y |
| Mesir | A | A | T | T | T | T | T | T |
| Mongolia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NP | NP |
| Mozambik | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Myanmar | NP | NP | A | A | A | A | A | A |
| Nepal | Y | A | A | A | A | A | A | A |
| Nikaragua | A | T | T | T | Y | Y | Y | Y |
| Niger | Y | NP | Y | Y | Y | Y | NP | A |
| Nigeria | Y | NP | Y | A | A | A | A | A |
| Norwegia | A | Y | A | A | A | A | A | A |
| Oman | A | T | T | T | T | T | T | T |
| Pakistan | Y | A | A | A | A | A | A | T |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|----|----|----|----|---|----|
| Panama | A | Y | Y | A | A | A | A | A |
| Pantai Gading | Y | Y | A | A | A | A | A | A |
| Papua Nugini | NP | A | A | T | T | T | T | T |
| Paraguay | A | A | A | T | T | NP | T | T |
| Peru | Y | A | A | A | A | A | A | A |
| Polandia | Y | Y | Y | NP | NP | A | A | A |
| Portugal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Prancis | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Qatar | T | A | A | T | T | T | T | T |
| Rumania | Y | Y | Y | NP | A | A | A | A |
| Rwanda | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| St Christopher and Nevis | - | - | - | - | - | - | - | - |
| St. Lucia | - | - | - | - | Y | Y | Y | T |
| St Vincent dan Grenadines | - | - | - | - | - | NP | T | NP |
| Samoa | - | - | A | A | A | A | A | A |
| Sao Tome dan Principe | NP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Saudi Arabia | A | T | T | T | T | T | T | T |
| Selandia Baru | A | A | A | A | T | T | T | T |
| Senegal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A |
| Seychelles | - | NP | NP | A | Y | Y | Y | Y |
| Sierra Leone | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Singapura | A | A | T | T | T | T | T | N |
| Siprus | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Solomon, Kepulauan | - | - | - | NP | NP | NP | A | N |
| Somalia | NP | Y | NP | NP | NP | T | A | A |
| Spanyol | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sri Lanka | A | A | A | A | A | A | A | A |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----|---|----|----|---|---|----|----|
| Sudan | A | A | A | A | T | T | T | T |
| Suriname | NP | T | T | T | T | T | T | T |
| Swaziland | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Swedia | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | A |
| Thailand | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Togo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Trinidad dan Tobago | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tunisia | NP | T | T | T | T | T | T | T |
| Turki | A | T | T | T | T | T | T | T |
| Uganda | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ukraina SSR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| USSR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Uni Arab Emirat | Y | A | A | A | A | A | NP | NP |
| Tanzania, Republik Persatuan | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Upper Volta | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A |
| Uruguay | A | T | T | T | T | T | T | T |
| Vanuatu | - | - | - | - | - | - | Y | Y |
| Venezuela | Y | A | A | A | A | A | A | A |
| Vietnam | - | - | Y | NP | Y | Y | Y | Y |
| Yaman | NP | A | NP | NP | T | T | NP | T |
| Yaman, Republik Demokratis | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Yordania | A | T | T | T | T | T | T | T |
| Yugoslavia | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Yunani | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Zaire | A | A | T | T | T | A | A | A |
| Zambia | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Zimbabwe | - | - | - | - | - | Y | Y | Y |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Total | 72:10: 43:19 | 68:20: 49:9 | 67:26: 47:9 | 59:31: 44:16 | 62:31: 45:14 | 58:35: 46:15 | 54:42: 46:15 | 50:46 50:11 |
| Proporsi suara untuk | 50% | 46.6% | 44.9% | 39.3% | 40.8% | 37.7% | 34.4% | 31.8% |

Y = Setuju; T = Menolak; A = Abstain; - = bukan anggota PBB pada saat pemungutan suara; NP = Tak Hadir pada saat pemungutan suara

Total = Y:T:A:NP Suara dalam Pemungutan Suara tentang Timor di PBB 1975 - 1982

Catatan akhir

1. Lihat paling akhir, Advisory Opinion on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, (2004) International Court of Justice [selanjutnya: ICJ], paragraf [selanjutnya: para] 155.
2. Ini termasuk di dalam Resolusi Dewan Keamanan [selanjutnya: DK] 384, 22 Desember 1975; Resolusi DK 389, 22 April 1976; Resolusi Sidang Umum [selanjutnya:SU] 3845 (XXX), 12 Desember 1975; Resolusi SU 31/53, 1 Desember 1976; Resolusi SU 32/34, 28 November 1977; Resolusi SU 33/39, 13 Desember 1976, Resolusi SU 35/27, 11 November 1980; Resolusi SU 36/50, 24 November 1981; Resolusi SU 37/30, 23 November 1982.
3. Common article 1(2) dari Perjanjian Internasional atas Hak-hak Sipil dan Politik selanjutnya:PIHSP] dan Pasal 1(2) dari Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya[selanjutnya: PIHESB], Resolusi SU 1514 (XV), 14 Desember 1960, para 2.
4. Pasal. 3, Deklarasi Pemberian Kemerdekaan bagi Negeri-negeri dan Bangsa Kolonial, Resolusi SU 1514 (XV), 14 Desember 1960.
5. Pasal 1(3), PIHSP dan Pasal 1(3) PIHESB
6. Komite Hak Asasi Manusia, General Comment 12, para 6.
7. Ibid.
8. Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Baik dan Kooperasi antarbangsa yang mengikuti Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa, Resolusi SU 2625 (XXV), 24 Oktober 1970
9. Opini Penasihat mengenai Konsekuensi Legal bagi Negara-Negara atas Keberlanjutan Keberadaan Afrika Selatan di Namibia (Afrika Barat-Daya) tanpa memperhitungkan Resolusi DK 276 (1970) (1971) ICJ Reports 16 at para 119; Opini terpisah dari Hakim Weeramantry dalam Kasus-kasus Mengenai Timor Timu r (Portugal v Australia) (1995) Laporan ICJ 90, esp at 204; art 41(2), Komisi Hukum Internasional [selanjutnya: KHI] Rancangan Pasal-pasal mengenai Tanggungjawab negara-negara untuk Aksi Pelanggaran Internasional, KHI, Komentar mengenai Rancangan Pasal-pasal atas tanggungjawab Negara-negara untuk Aksi Pelanggaran Nasional, at hal. 287-291, esp p.290
10. Resolusi DK 384, 22 Desember 1975, para 1; dan Resolusi DK 389, 22 April 1976, para 1.
11. Pasal 25, Piagam PBB
12. Resolusi DK 384, 22 Desember 1975, para 2; Resolusi DK 389, 22 April 1976, para 2.
13. Resolusi DK 384, 22 Desember 1975, para 3.
14. Dokumen 391, Jakarta, 23 Desember 1975, dalam Wendy Way (ed.), Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor 1974-1976, Department of Foreign Affairs and Trade Documents on Australian Foreign Policy, Melbourne University Press, Victoria, 2000 [selanjutnya: Wendy Way, (ed.), DFAT], hal.650
15. Dokumen 154, Jakarta, 10 Juli 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal.291

16. Resolusi SU 1542 (XV), 15 Desember 1960 Krieger (ed), *East Timor and the International Community Basic Documents*, Grotius, Cambridge University Press, 1997. hal. 29-30.
17. Korespondensi antara Dr Salazar dan Perdana Menteri Australia, R.G. Menzies, 1961-1964, Penyelidikan Senat Australia ke Timor Timur, 1999-2000, Submisi 5, hal. 31-47.
18. Kabel rahasia, 5 Februari 1963, dikeluarkan oleh Pemerintah Australia pada tahun 2002.
19. José Ramos-Horta, *Funu: The Unfinished Saga of East Timor*, Red Sea Press, Trenton, New Jersey, 1978, hal. 14.
20. Secretariat to the Special Committee on Decolonisation, Working Paper on Timor, 20 November 1975. Krieger, hal. 18-26.
21. Dokumen 406, Jakarta, 24 Januari 1976, di Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 674. Pandangan yang serupa diungkapkan oleh Duta Besar Selandia Baru, Roger Peren, tahun 1978, di material New Zealand Government Official Information Act (OIA) [selanjutnya: New Zealand...OIA]Dokumen Pemerintah Selandia Baru, Vol. 1, 13 Januari 1978.
22. Departemen Hubungan Politik PBB, Laporan mengenai Dekolonisasi, No. 7, Agustus 1976, hal. 43.
23. Resolusi DK 3294 (XXIX), 13 Desember 1974, para 2
24. Mario Lemos Pires, Kesaksian diberikan pada kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003
25. Surat dari Misi Permanen Portugal kepada Sekretaris Jenderal PBB, 28 November 1975, di Krieger,hal. 39.
26. Communique of the Council of Ministers. dikutip dalam Laporan PBB mengenai Dekolonisasi, op.cit, hal. 45.
27. Kontak Rahasia antara Portugal, Indonesia, dan PGET: Juni-Juli 1976, di Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 782-783.
28. Case Concerning East Timor (Portugal v Australia) (1995), Laporan International Court of Justice 90.
29. Mario Lemos Pires, kesaksian diberikan pada, ibid.
30. CAVR wawancara dengan Adelino Gomes, Dili, 11 Juni 2003.
31. Krieger, hal. 39-40.
32. David Scott, kesaksian diberikan pada diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004, hal. 2.
33. Laporan Senat Australia, Timor Timur, Desember 2000, hal. 138.
34. Surat kepada J.L.Jones, Foreign and Commonwealth Office, 11 Juni 1976,di dokumen terdeklasifikasi (Dowson File 7.25).
35. Pernyataan, 6 September 1983, Torben Retboll (ed.) *East Timor: The Struggle Continues*, International Working Group for Indigenous Affairs, Copenhagen, Oktober 1984, hal. 197.
36. Dokumen 888, 4 Maret 1993, Arsip Keamanan Nasional di George Washington University [selanjutnya:AKN]
37. Jamsheed Marker, *East Timor: A Memoir of the Negotiations for Independence*, McFarland & Company, Inc., London, 2003, hal. 73.
38. Resolusi DK 1272, 25 Oktober 1999.
39. Resolusi SU 56/282, 8 Mei 2002.
40. Catatan Resmi Sidang Umum, dikutip dalam Departemen Hubungan Politik PBB, Laporan mengenai Dekolonisasi, hal. 41.
41. Dikutip dalam Donald Weatherbee, "Portuguese Timor: an Indonesian Dilemma", *Asian Survey*, 6 (12), Dec. 1966, hal. 689.
42. Weatherbee, hal. 690.
43. Catatan Resmi Sidang Umum, dikutip dalamdikutip dalam Departemen Politik PBB, Report on Decolonisation,,hal. 47.
44. Catatan Resmi Sidang Umum, dikutip dalam Departemen Politik PBB, Report on Decolonisation dikutip dalam hal. 14, 48.
45. Dokumen 95, Jakarta, 24 Februari 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 198.
46. Richard Woolcott, *The Hot Seat: Reflections on Diplomacy from Stalin's Death to the Bali Bombings*, Harper Collins Publishers, Sydney, 2003, hal. 306.
47. Dokumen 217, Jakarta, 6 September 1975, dalam Wendy Way (Ed.), DFAT, hal. 391-392.

48. Krieger, hal. 63.
49. Resolusi SU 3485 (XXX), 12 Desember 1975 dan Resolusi DK 384 (1975), 22 Desember 1975, dalam Krieger, hal. 123, 53.
50. Laporan Winspeare Guicciardi kepada Sekretaris Jenderal, 29 Februari 1976, dalam Krieger, hal. 92.
51. Krieger, hal. 47-49.
52. Krieger, hal. 124.
53. Kongres AS Sidang dengar pendapat mengenai Hak Asasi Manusia di Timor Timur, Committee on International Relations, 19 Juli 1977, hal. 47.
54. 1 Juni 1976, dalam NZ...OLA, Volume 1
55. José Ramos-Horta, surat kepada Sekretaris Jenderal, 8 Juli 1976. UN Doc. S/12133.
56. Fransesc Vendrell, Kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
57. Kesaksian diberikan pada Ibid.
58. Krieger, hal. 275.
59. dikutip dalam Woolcott, hal. 164.
60. Siaran Pers PBB, 3 September 1999.
61. Notulen Kabinet, Canberra, 5 Februari 1963, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 26.
62. Dokumen 375, Jakarta, 13 Desember 1975. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 627.
63. Notulen Kabinet, Canberra, 21 Februari 1963, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal.26, n.1
64. Ibid., hal. 26-27.
65. Pengiriman kabar dari Furlonger, Jakarta, 19 Januari 1973. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, p. 43.
66. 1 Desember 1970. Dokumen, p. 42.
67. 30 Mei 1973: Catatan R. Woolcott kepada Whitlam. Documents, p. 45.
68. Australian Senate Report, East Timor, Desember 2000, p. 141.
69. Dokumen 263, Canberra, 16 Oktober 1975. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, p. 263.
70. Dokumen 26, Yogyakarta, 6 September 1974, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 91-92
71. Dokumen 45, Lisbon, 14 Oktober 1974. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, p. 119.
72. Dokumen 24, Canberra, 2 September 1974, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 91-92.
73. Document 123, Townsville, 4 April 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 246.
74. Dokumen 169, Jakarta, 17 Agustus 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 313-314.
75. Dokumen 191, Canberra, 27 Agustus 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 347
76. Dokumen 265, Jakarta, 16 Oktober 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 347
77. Dokumen 310, Jakarta, 29 Oktober 1975. dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 533.
78. Department of Foreign Affairs and Trade, East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge, Canberra, 2001, p. 13.
79. Australian Senate Report, East Timor, hal. 167.
80. Ibid., hal. 174-75.
81. Untuk teks laporan survei, lihat East Timor in Transition 1998-2000: An Australian Policy Challenge, Department of Foreign Affairs and Trade [selanjutnya East Timor in Transition, DFAT], Canberra 2001, hal. 177-179.
82. Australian Senate Report, East Timor, hal. 142.
83. Resolusi DK 384 (1975), 22 Desember 1975, dalam Krieger, pp. 53-54.
84. Ibid.
85. Laporan SRSG, 29 Februari 1976. Krieger, pp. 87-93.
86. Resolusi DK 389 (1976), Krieger, hal. 93.
87. Fransesc Vendrell, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, Dili, 15-17 Maret 2004.
88. Kesaksian diberikan pada Ibid.
89. Ibid.
90. Ibid.
91. Jamsheed Marker, hal. 204
92. Teks Kesepakatan terdapat di, Self-determination in East Timor: The United Nations, the Ballot, and International Intervention, oleh Ian Martin. Lynne Rienner Publishers, 2001, pp. 141-148.

93. Resolusi UNSC 1236 (1999).
94. Mark Riley, "How the UN plans to abandon a people", Sydney Morning Herald, 7 Agustus 1999.
95. Ian Martin, kesaksian diberikan pada diberikan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
96. Kesaksian diberikan pada Ibid.
97. Resolusi DK 1264 (1999).
98. Dokumen 55, Jakarta, 29 Oktober 1974, dalam Wendy Way (Ed.) DFAT p. 130.
99. Dokumen 98, Canberra, February 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 201
100. 16 Desember 1975. dalam Krieger, hal. 69.
101. Ramos-Horta, Funu: The Unfinished Saga of East Timor, Red Sea Press, 1987, hal. 156.
102. UK Unclassified Documents, Dowson Files 7.2
103. Dokumen 478, Jakarta, 3 Juli 1976, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 807.
104. Krieger, hal. 85
105. Krieger, op.cit, hal. 117
106. Resolusi Sidang Umum 3485 (XXX), 12 Desember 1975.
107. Krieger, hal. 152.
108. Konvensi yang berhubungan dengan perpajakan ganda dan penghindaran fiskal, ditandatangani oleh Prancis dan Indonesia pada tanggal 14 September 1979. Krieger, hal. 292
109. Ramos-Horta, Funu, hal. 142
110. Gabriel Defert, Timor Est, le genocide oublie: Droit d'un peuple e raisons de'Etat, L'Harmattan, Paris, 1992, hal. 246.
111. Ibid.
112. Ramos-Horta, Funu, hal. 142.
113. New Zealand...OIA Material, Vol. 1
114. Dokumen 58, Canberra, 14 November 1974, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 133.
115. Woolcott, hal. 149.
116. Debat Dewan Keamanan 18 Desember 1975 dan 22 April 1976, dalam Krieger, hal 81, 117.
117. Ramos-Horta, Funu, hal. 109.
118. Kawat ke London, 10 Februari 1976, dalam UK unclassified documents Dowson Files 7.4
119. Defert, hal.241-243; Ramos-Horta, Funu, hal. 155.
120. UN Monthly Chronicle, Vol. 1(4), Agustus-September 1964, hal. 32.
121. Dokumen 157, Jakarta, 21 Juli 1975, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 295.
122. Kabel rahasia, 24 Oktober 1975, dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK, Dowson Files 6
123. Ibid.
124. Australian Senate Report, East Timor, Desember 2000, p. 137.
125. Kabel rahasia, 24 Oktober 1975, dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK, Dowson Files 7.
126. Dokumen 249, 2 Oktober 1975, in Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 443.
127. See Richard Mann, 400 years and More of The British in Indonesia, Gateway Books, United Kingdom, 2004.
128. J. A. Ford, 10 Februari 1976, dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK Dowson Files 7.4.
129. A.K. Goldsmith, South East Asian Department FCO, 4 Februari 1976, dalam dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK Dowson Files 7.5.
130. J. A. Ford, 2 Januari 1976, dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK, Dowson Files 7.2.
131. Krieger, p. 118.
132. A.M. Simons, 20 Mei 1976. Dowson Files 7.15.
133. 11 Juni 1976. dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK Dowson Files 7.26.
134. Krieger, p. 164.
135. Baroness Trumpington, House of Lords, 16 Juli 1992. Krieger, p. 301.
136. Krieger, p. 302.
137. Tapol and Campaign Against the Arms Trade (CAAT) Factsheet, Juni 2004.
138. United Kingdom –House of Lords, Official Report, Parliamentary Debates, Unstarred Question-Indonesia: Aid and Human Rights, 16 Juli 1992. Krieger, p. 302.

139. 24 Mei 1976. di dalam dokumen-dokumen terdeklasifikasi UK, Dowson Files 7.16.
140. Saran yang disampaikan kepada Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Politik, Averell Harriman, 5 Februari 1963. Dokumen 2 NSA
141. Ibid.
142. Gary Gray, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004. Gary Gray memberi kesaksian dalam kapasitas sebagai pribadi.
143. Menteri Luar Negeri, 25 September 1974. Dokumen 15 NSA.
144. Kedutaan AS di Canberra, 20 Februari 1975. Dokumen 24 NSA.
145. Dewan Keamanan Nasional, 4 Maret 1975. Dokumen 40 NSA.
146. Pertemuan Staf Menteri Luar Negeri, 8 Oktober 1975. Dokumen 90 NSA.
147. Permohonan kepada Presiden AS, 5 Desember 1975. Dokumen 174 NSA.
148. Memo pembicaraan Gedung Putih, 10 Desember 1975. Dokumen 163 NSA.
149. Krieger, hal. 119
150. Kreiger, hal. 239
151. Laporan Dewan Keamanan Nasional kepada Brent Scowcroft, 12 Desember 1975. Dokumen 165 NSA.
152. Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 26 Mei 2004.
153. Human rights in East Timor and the Question of the Use of US Equipment by the Indonesian Armed Force: Audiensi di hadapan Sub-Komite mengenai Urusan Asia dan Pasifik dan Sub-Komite mengenai Organisasi-organisasi Internasional, 10, 17, 22 dan 23 Maret 1977, US Government Printing Office, Washington, 1977.
154. Dewan Keamanan Nasional, 29 Juni 1976. Dokumen 312 NSA.
155. Surat kepada Senator Humphrey, 15 Oktober 1976. Dokumen 355 NSA.
156. Pernyataan yang disampaikan Kenneth M Quinn, Asisten Sementara Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, kepada Audiensi di hadapan Komite Senat Hubungan Luar Negeri AS, 6 Maret 1992, dalam Krieger, hal. 318.
157. Memorandum untuk Presiden Carter, 14 Juni 1977. Dokumen 398 NSA.
158. Dikutip oleh Gary Gray kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
159. Arnold Kohen, kesaksian diberikan pada pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
160. 31 Januari 1992. Dokumen 872 NSA.
161. CHR Vole tentang Timor Leste, 4 Maret 1993. Dokumen 885 NSA.
162. Kedutaan AS Jakarta untuk Menteri Luar Negeri, 5 Maret 1993. Dokumen 885 NSA.
163. Siaran Pers Kementerian Luar Negeri AS, 4 September 1999.
164. Resolusi SU 1514 (XV) dan 1541 (XV). Lihat Buku Tahunan 1960 PBB, hal. 49,509.
165. Shizuo Saito, *New Trends at the United Nations: Reactions to the Structural Changes in the International Order*, Shinyudo, Tokyo, 1979, hal. 19.
166. Ramos-Horta, Funu, hal. 122.
167. Krieger, hal. 109.
168. 10 Januari 1976. dalam NZ...OIA Material, Vol. 1.
169. 4 Mei 1976, dalam NZ...OIA Material, Vol. 1.
170. Krieger, hal. 50.
171. April 1976, Dokumen NSA 252
172. Dokumen 406, Jakarta, 24 Januari 1976, dalam Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 674.
173. East Timor in Transition, DFAT, , hal. 12. Untuk Persetujuan Pajak, lihat Krieger, hal. 292.
174. Pernyataan oleh 92-anggota Diet Jepang, Members Forum di Timor Timur kepada Komite Khusus Dekolonisasi PBB, New York, 8 Agustus 1991.
175. Petisi kepada Komite Khusus Dekolonisasi, 8 Agustus 1991.
176. Kenneth Christie dan Denny Roy, *The Politics of Human Rights in East Asia*, Pluto Press, London, 2001, hal, 274-275. Piagam ODA direvisi pada tahun 2003.
177. Terbitan Pers, Menteri Luar Negeri Jepang, 4 September 1999.

178. Henry Kissinger kepada sebuah pertemuan makan siang di Sydney, 13 November 1995., dalam E G Whitlam, "E.G. Whitlam launches Bill Nicol's Timor – a Nation Reborn", It's time e-magazine, Issue 7, University of Sydney Co-op Bookshop, 26 Juni 2002.
179. Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia setelah pertemuan dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal Panggabean, 22 Juli 1974. dalam NZ...OIA Material, Volume 1.
180. Dikutip dalam Peter Elgin East Timor, The Globe and Mail and Propaganda, Portuguese Studies Review 11 (1) 2003, hal. 69-70.
181. Don McKinnon, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Pidato kepada Canterbury School of Journalism, 21 Maret 1995, dalam NZ...OIA Material, Volume 3, Februari 1994-Oktober 1995
182. Eamon Duffy, Saints and Sinners, A History of the Popes, Yale University Press, Princeton, New Jersey, 2002, hal 367.
183. Dikutip dalam Frédéric Durand, Catholicisme et protestantisme dans l'île de Timor: 1556-2003, Irasec, Bangkok, 2002, hal 89.
184. Pat Walsh, "Church May Hold Key to Timor's Future", National Outlook, January 1982, hal 14.
185. Wawancara CAVR dengan Pat Walsh, Dili, 25 February 2005
186. Dikutip dalam Komisi Katolik untuk Keadilan, Pembangunan, dan Perdamaian, Melbourne, The Church and East Timor: A collection of documents by National and International Church Agencies, Catholic Commission for Justice, Development and Peace, Melbourne, 1993, hal 13-15; dan Frédéric Durand, hal 92-93.
187. Dikutip dari jumpa pers Christians in Solidarity with East Timor, 20 Mei 1983.
188. Surat kepada Monsignor Francesco Canalini (1986-1991), dalam The Church and East Timor: A Collection of documents by National and International Church Agencies, Catholic Commission for Justice, development and Peace, Melbourne, hal 10.
189. Surat kepada Pastor Pierre Toulat, Sekretaris, Komisi Prancis untuk Keadilan dan Perdamaian, Paris.
190. Suster Monica Nakamura, kesaksian diberikan pada pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
191. Radio Renascenza, 12 Mei 1991, dipetik dari Frédéric Durand, hal 111.
192. Wawancara CAVR dengan Alex Gusmão, 28 Maret 2005.
193. Wawancara dengan Kay Rala Xanana Gusmão pada bulan September 1990. Robert Domm "East Timor: Keeping the Flame of Freedom Alive", ACFOA Development Dossier 29, 1991, hal 24.
194. Dikutip di Smythe, hal 199.
195. dikutip dalam Dikutip di Kohen, hal 154.
196. Pat Walsh, East Timor's Political Parties and Groupings, ACFOA, April 2001
197. Domingos de Oliveira, mantan Sekretaris Jenderal UDT, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik 1974-1976, 15-18 Desember 2003.
198. Ibid.
199. Fretlin on the World Stage", in Wendy Way (ed.), DFAT, hal. 450
200. Jill Jolliffe, East Timor: Nationalism and Colonialism, University of Queensland Press, 1978, hal. 221.
201. David Scott, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
202. Krieger, hal. 66-7.
203. Krieger, hal. 96.
204. Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 26 Mei 2004.
205. Ibid.
206. Ibid.
207. Ibid.
208. UN Press Release, Department of Public Information Press Section, GA/D/2334, 9 November 1982.
209. Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, 29 Juli 2004.
210. Statement on the Current Portuguese Attitude on the Question of East Timor, 6 September 1983, Ost-Timor Information, No. 3, Oktober 1983.
211. Surat dari Parliamentary Human Rights Group in Britain kepada Sekretaris Jenderal, 10 Agustus 1984, dalam Torben Retbøll, hal. 209-211

212. Wawancara CAVR dengan João Carrascalão, Dili, 30 Juli 2004.
213. wawancara CAVR dengan Zacarias da Costa, 14 Maret 2005.
214. Maria Angela Carrascalão, *Timor: Os Anos da Resistencia*, Mensagem, Lisbon, 2002, hal. 135.
215. Estavão Cabral, 'Fretilin: Roots of the Friction', *Fitun*, No. 11, September 1993.
216. Wawancara CAVR, dengan João Carrascalão, Dili 30 Juli 2004.
217. Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili 26 Mei 2004.
218. Surat Persatuan Nasional Timor kepada Presiden Republik Portugis, Mário Soares, 9 Maret 1988, dalam Krieger, hal. 280.
219. Pernyataan oleh Uni Demokrasi Timor kepada Komite Khusus Dekolonisasi, New York, 13 Agustus 1987.
220. Pesan 7 Desember 1987 mengenai 12 tahun invasi Indonesia., dalam Sarah Niner (ed.), *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão*, Aurora Books, Victoria, 2000, hal. 129-136.
221. Ben Anderson et al, wawancara dengan Mário Carrascalão, *Indonesia* (76), Oktober 2003, hal. 21-22.
222. *Communiqué of the Nationalist Convergence of Timor*, 10 November 1989, dalam Krieger, hal. 281-282.
223. José Ramos-Horta, *Towards a Peaceful Solution in East Timor*, East Timor Relief Association (ETRA), Sydney, 1996, hal. 31.
224. Wawancara CAVR dengan José Ramos-Horta, Dili, 26 Mei 2004.
225. Nobel Committee Press Release, 1996.
226. Wawancara CAVR dengan Agio Pereira, 24 September 2004.
227. *East Timor in Transition*, DFAT, hal. 10.
228. Jamsheed Marker, *East Timor*
229. Lihat Fernando de Araujo, 'kampanye untuk kemerdekaan CNRT', dalam James J. Foxdan Dionisio Babo Soares(ed.), *Out of the Ashes*, Crawford House, Canberra, 2000, hal. 106-125.
230. Wawancara CAVR dengan Agio Pereira, 24 September 2004.
231. Abel Guterres, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
232. Luisa Teotonio Pereira, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
233. Abel Guterres, kesaksian, *Ibid.*
234. *Ibid.*
235. *Ibid.*
236. Luisa Teotonio Pereira, kesaksian diberikan pada Audiensi CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
237. David Scott, manuskrip tak diterbitkan, salinannya ada di dalam arsip CAVR.
238. Luisa Teotonio Pereira, kesaksian diberikan pada Audiensi CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
239. Arnold Kohen, kesaksian diberikan pada Audiensi CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004, Dili.
240. Wawancara CAVR dengan John Taylor dan Arnold Kohen, Dili, 2 Februari 2005.
241. Untuk catatan hasil kerja Steve Cox di Inggris setelah pembantaian tersebut, lihat Kirsty Sword Gusmão with Rowenna Lennox, 'A Woman of Independence', Macmillan, Sydney, 2003, hal. 38-39.
242. Lihat, sebagai contoh, Peter Slezak (ed.), *A Travesty of Justice: Xanana's Defence*, East Timor Relief Association, Sydney, Mei 1996.
243. Esai oleh Carmel Budiardjo dalam 'East Timor: Testimony by Elaine Briere', Toronto, 2004, hal. 68.
244. Lihat David T. Hill 'East Timor and the Internet: Global political leverage in/on Indonesia', *Indonesia* (73), April 2002, hal.25-51.
245. Dikutip dalam Carlos Santiago Nino, 'Radical Evil on Trial', Yale University Press, Princeton, New Jersey, 1996, p. 186.
246. YRD, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik CAVR mengenai penentuan nasib sendiri, 15-17 March 2004.
247. Jean Pierre Catry, Memo ke CAVR, 28 Januari 2005.

248. East Timor in Transition , DFAT, hal. v.
249. Lihat Ian Martin, Self-determination dalam East Timor...; hal. 88.
250. Para 1, mukadimah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
251. YRD, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
252. Liem Soei Liong, Komunikasi ke CAVR, 28 Februari 2005.
253. YRD, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
254. Nugroho Katjasungkana, kesaksian diberikan pada Ibid.
255. Yeni Rosa Damayanti, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
256. Dikutip dalam George J. Aditjondro 'Menyongsong Matahari Terbit di Puncak Ramelau', Yayasan Hak dan Fortilos, Jakarta, 2000, hal. 251.
257. James Goodman "Indonesians for East Timor", Inside Indonesia, No 59, 1999.
258. Ade Rostina Sitompul, kesaksian diberikan pada diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penahanan Politis, 17 Februari 2003, hal. 5-6
259. Pernyataan oleh Konferensi INFID ke 11, Bonn, 4-6 Mei 1998.
260. Patrick Walters, 'Let Timor-Leste Decide, Muslim leader', The Australian, 11 Desember 1996.
261. Pernyataan oleh Konferensi INFID ke 12 tentang Peran Militer dalam Masyarakat Indonesia, Bali, 14-17 September, 1999.
262. Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri, Dili, 15-17 Maret 2004.
263. Yeni Rosa Damayanti, kesaksian diberikan pada diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004
264. Ian Martin, Self-determination in East Timor...; hal. 13.
265. Geoffrey C. Gunn, "International Actors and East Timor's Right to Self-determination", Laporan ke CAVR, Agustus 2003, hal. 138.



Chega!

Bagian 7
Bab 7.2.

Pembunuhan di luar hukum
dan penghilangan paksa

Bagian 7.2. Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa

847 | Pendahuluan

- 847 | Definisi
- 850 | Metodologi
- 851 | Tinjauan kuantitatif
- 852 | Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh Resistansi
- 852 | Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia

855 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa selama konflik internal: 11 Agustus - 24 September 1975

857 | Boks: Siaran-siaran radio: berpikah dan menghasut kekerasan

- 862 | Pembunuhan di luar hukum sebelum aksi bersenjata UDT 11 Agustus
- 863 | Pembunuhan pada 11 Agustus, hari aksi bersenjata UDT
 - 863 | Boks: Hari-hari kekacauan dan bersenjata di Dili
 - 865 | Pembunuhan di luar hukum oleh UDT Liquiça
 - 866 | Pembunuhan-pembunuhan oleh UDT di Manufahi, Ermera, dan Aileu
- 866 | Pembunuhan di luar hukum setelah aksi bersenjata UDT, 12 - 17 Agustus
 - 867 | Pembunuhan oleh pendukung UDT di Liquiça
 - 867 | Boks: Meningkatnya ketegangan di Maubisse, Ainaro
 - 869 | Pembunuhan terpisah oleh pendukung Fretilin dan UDT di Aileu dan Manufahi
 - 869 | Pembunuhan oleh pendukung UDT di Ermera
 - 870 | Pembunuhan massal oleh UDT dan Fretilin di Turiscaí dan Laclubar
- 871 | Pembunuhan di luar hukum antara 18 - 20 Agustus
 - 871 | Pembunuhan massal oleh Fretilin di Aileu
 - 872 | Pembunuhan balas dendam oleh Fretilin di Liquiça
 - 872 | Pembunuhan oleh pasukan UDT di Ermera
- 873 | Pembunuhan antara 21 Agustus dan 30 Agustus, periode besar konflik bersenjata internal
 - 873 | Pembunuhan tahanan oleh UDT di Palapaço, Dili

874 | Boks: Orang Portugis terbunuh selama Konflik Internal

- 874** | Pembunuhan massal oleh Fretilin di Ermera
- 874** | Pembunuhan tahanan oleh UDT di Ermera
- 875** | Pembantaian tahanan oleh UDT di Wedauberek (Mahaquidan, Alas, Manufahi)
- 876** | Pembunuhan pemimpin Apodeti oleh Fretilin di Same (Manufahi)
- 876** | Pembunuhan di luar hukum oleh pendukung Fretilin di Aileu
- 877** | Pembunuhan tahanan dan pembunuhan lainnya pada September
 - 877** | Pembunuhan massal tahanan oleh UDT di Klaek Reman (Ermera, Ermera)
 - 878** | Pembunuhan massal tahanan oleh UDT di Aifu (Ermera)
 - 879** | Pembunuhan seorang tahanan UDT dan penghilangan pemimpin Apodeti oleh pasukan Fretilin/Falintil di Railaco (Ermera)
 - 880** | Pembunuhan tahanan oleh Fretilin di Aileu
 - 880** | Eksekusi di luar hukum oleh pasukan Fretilin/Falintil di Manatuto
 - 880** | Pembunuhan massal tahanan UDT oleh Fretilin di Katrai Kraik dan Ermera (Ermera)
- 881** | Pembunuhan lainnya

881 | Boks: Tanggung jawab politik atas konflik bersenjata internal

883 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa selama pendudukan Indonesia (1975 - 1999)

- 883** | Pembunuhan di luar hukum oleh militer Indonesia sebelum invasi pada Desember 1975
 - 883** | Distrik-distrik barat (Agustus - Desember 1975)
 - 884** | Pembunuhan lima wartawan di Balibó
 - 885** | **Guido dos Santos**
 - 886** | **Olandino Guterres**
 - 887** | **Tomás Gonçalves**
 - 887** | **Kemungkinan urutan kejadian**
 - 888** | **Kesimpulan**
- 889** | Pembunuhan di luar hukum oleh militer Indonesia selama invasi Dili pada 7 - 8 Desember 1975
 - 889** | Pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil etnis Cina di Colmera, 7 Desember 1975
 - 892** | Pembunuhan di gedung Assistencia, 7 Desember 1975
 - 896** | Mayat-mayat di markas Polisi Militer Portugis
 - 896** | Pembunuhan di Matadouro, 7 Desember 1975
 - 898** | Pembunuhan di Sungai Maloa, 7 Desember 1975

- 899 | Dermaga Dili, 8 Desember 1975
- 902 | Eksekusi massal, menjelang sore
- 904 | Penghilangan kelompok pekerja etnis Cina, menjelang petang pada 8 Desember
- 906 | Eksekusi di Ailok Laran, 8 Desember 1975
- 908 | Eksekusi perorangan dan mayat-mayat yang ditemukan di Dili
- 910 | Pembunuhan di luar hukum oleh Fretilin setelah invasi Indonesia (Desember 1975 dan Februari 1976)
- 911 | Pembunuhan di Aileu, Desember 1976
- 914 | Pembunuhan di luar hukum terhadap para tahanan oleh Fretilin di Maubisse (Ainaro)
- 915 | Pembunuhan di Same, akhir Januari 1976
- 918 | Tingkat pertanggungjawaban
- 922 | **Boks: Tanggung jawab Fretilin dalam pembunuhan massal pada Desember 1975 dan Januari 1976**
- 925 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa yang dilakukan ABRI setelah invasi Indonesia, 1976 - 1979
- 926 | Pola pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa yang dilakukan ABRI, 1976-1979
- 926 | **Penduduk sipil yang terbunuh selama operasi militer**
- 927 | **Penduduk dibunuh ketika sedang bekerja sehari-hari**
- 929 | **Penduduk dibunuh karena dicurigai bekerjasama dengan Fretilin/Falintil atau mengetahui tentang mereka**
- 930 | **Penduduk sipil dibunuh sebagai pembalasan terhadap serangan Falintil**
- 931 | **Penduduk sipil dibunuh selama serangan ABRI**
- 931 | **Penduduk sipil yang dibunuh setelah berada dalam tahanan pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantu mereka**
- 934 | **Boks: "Ia pergi sekolah..."**
- 936 | **Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa terhadap para penduduk sipil dan petempur yang menyerah dan tertangkap**
- 937 | **Pembunuhan dan penghilangan di dalam tahanan militer sesudah penyerahan diri atau penangkapan**
- 938 | **Boks: Pembunuhan massal terhadap penduduk sipil yang tertangkap di Turiscai**
- 939 | **Pembunuhan bersasaran terhadap orang yang dicurigai sebagai anggota dan pimpinan Fretilin/Falintil, sesudah penyerahan diri atau penangkapan**

943 | Pembunuhan sesudah jatuhnya *bases de apoio*

945 | Dili

948 | Boks: Hilangnya Luisa

949 | Distrik Baucau

956 | **Baguia**

956 | **Baucau**

957 | **Laga**

958 | **Quelicai**

958 | **Vemasse**

958 | **Venilale**

959 | Distrik Lautém

975 | Distrik Manufahi

989 | **Alas**

991 | **Turiscail**

991 | **Fatuberliu**

993 | Boks: Eksekusi massal di Fahinehan

994 | Uatolari, Viqueque

1005 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh Fretilin/
Falintil, 1976-1979

1006 | Pembunuhan-pembunuhan Fretilin/Falintil: konteks politik

1006 | **Pembunuhan-pembunuhan oleh Fretilin/Falintil terhadap para anggota UDT dan Apodeti**

1008 | **Pembunuhan-pembunuhan sebagai akibat dari konflik internal Fretilin 1976**

1013 | **Pembunuhan akibat konflik internal Fretilin 1977**

1020 | **Pembunuhan dan kematian dalam penahanan dari para tahanan yang dipindahkan ke Ermera dan Viqueque**

1021 | **Pembunuhan dan kematian dalam penahanan dari para tahanan di distrik-distrik bagian timur**

1024 | Pembunuhan dan penghilangan nonpetempur oleh Fretilin/Falintil

1024 | Kematian dan pembunuhan dalam Renal dan pusat-pusat penahanan Fretilin lainnya

1028 | Pembunuhan berhubungan dengan warga sipil yang menyerah kepada pasukan Indonesia

1029 | Pembunuhan selama penyerahan diri

1029 | Pembunuhan setelah penyerahan diri

1032 | Pembunuhan berhubungan dengan serangan dan serbuan Indonesia

1035 | Pembunuhan warga sipil setelah jatuhnya *bases de apoio*

1036 | Pembunuhan warga sipil yang mencari makanan atau melakukan pekerjaan sehari-hari

- 1039 | Pembunuhan berhubungan dengan pelanggaran disiplin
- 1039 | Pembunuhan lainnya
- 1040 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh ABRI/TNI pada 1980 - 1984
 - 1040 | Pembunuhan dan penghilangan setelah serangan pihak Resistansi di Dili pada 10 Juni 1980
 - 1055 | September 1981: Eksekusi di Aitana dalam Operasi pagar Betis
 - 1057 | **Boks:** Saksi-saksi pembunuhan massal di sekitar Gunung Aitana, September 1981
 - 1060 | Agustus - Desember 1982: Eksekusi dan penghilangan setelah serangan Falintil di kawasan Gunung Kablaki
 - 1062 | **Boks:** Jakarta 2: Sebuah tempat eksekusi
 - 1065 | Agustus - Oktober 1983: Pembunuhan di Viqueque setelah Insiden Kraras
 - 1065 | **Pelanggaran sebelum Pemberangkatan Kraras**
 - 1066 | **Pemberontakan di Viqueque**
 - 1066 | **Pembalasan Indonesia di sekitar Kraras**
 - 1067 | **Pembantaian di Caraubalau**
 - 1069 | **Pembantaian di Tahu Bein**
 - 1072 | **Pembunuhan-pembunuhan lain di wilayah Kraras**
 - 1073 | Eksekusi di luar hukum dan penghilangan lain di kawasan timur (1983 - 1984)
 - 1073 | **Viqueque**
 - 1075 | **Lautém**
 - 1085 | **Boks:** Eksekusi di depan umum di Muapitine
 - 1089 | **Baucau**
 - 1091 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa di Dili dan Wilayah Tengah, 1983 - 1984
 - 1091 | **Dili**
 - 1093 | **Aileu**
 - 1094 | **Manufahi**
 - 1096 | **Ainaro**
 - 1097 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan di wilayah barat (1983 - 1984)
 - 1097 | **Distrik Covalima, Bobonaro, dan Liquiça**
- 1101 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh TNI 1985 - 1989
 - 1102 | Eksekusi di luar hukum dan penghilangan paksa wilayah timur (1985 - 1989)
 - 1105 | Pembunuhan dan penghilangan lainnya (1985 - 1989)

1106 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh pasukan keamanan Indonesia, 1990 - 1998

1106 | Pembantaian Santa Cruz (November 1991)

1110 | Boks: Kematian Kamal Bamadhaj

1111 | **Dugaan pembunuhan di Rumah sakit Wirahusada**

1112 | **Kebersalahan**

1114 | Studi kasus: Penyelidikan oleh Indonesia terhadap peristiwa di Perkuburan Santa Cruz, 12 November 1991

1114 | **Pendahuluan**

1115 | **Latar belakang**

1117 | **Penyelidikan polisi sipil**

1120 | **Laporan oleh berbagai komando militer di Timor-Leste**

1121 | *Laporan Warouw Pertama*

1123 | *Kegagalan dalam metode penyelidikan militer*

1124 | *Laporan Warouw Kedua*

1125 | **Penyelidikan oleh Polisi Militer**

1125 | *Laporan Polisi Militer Pertama*

1126 | *Laporan Polisi Militer Kedua*

1126 | *Laporan Polisi Militer Ketiga*

1128 | *Metode penyelidikan Polisi Militer*

1129 | Boks: Pertanyaan yang tidak terjawab

1133 | **Penyelidikan dan laporan Komisi Penyelidikan Nasional (KPN)**

1137 | **Tindakan yang diambil terhadap mereka yang bertanggung jawab**

1137 | *Tindakan terhadap para perwira senior*

1138 | *Pembersihan internal*

1138 | *Pengadilan militer di Bali*

1139 | *Keputusan untuk melakukan penuntutan*

1140 | *Keputusan tuduhan yang dijatuhkan terhadap para anggota pasukan keamanan dan hukuman yang diberikan*

1141 | *Perkara atas Aloysius Rani*

1142 | **Kesimpulan**

1145 | Eksekusi di luar hukum dan penghilangan paksa (1992 - 1995)

1145 | Januari 1995: Eksekusi-eksekusi di Gariana, Liquiça

1145 | Boks: Kesaksian Jacinta Alves Correia

1147 | Eksekusi di Baucau dan Manatuto saat kunjungan wakil-wakil Uni Eropa (Juni 1997)

- 1147 | Eksekusi dan penghilangan di Alas, Manufahi (November 1998)
- 1149 | Pendahuluan menjelang pembunuhan-pembunuhan oleh milisi pada 1999
- 1151 | Pelanggaran-pelanggaran fatal oleh Fretilin/Falintil, 1980 - 1999
- 1151 | Eksekusi di luar hukum dan penghilangan paksa oleh Fretilin/Falintil pada 1980-an
- 1158 | Pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil, 1985 - 1989
- 1161 | Pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil, 1990 - 1998
- 1164 | Pelanggaran fatal oleh Falintil pada 1999
- 1166 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, 1999
- 1169 | Januari sampai akhir Mei
- 1170 | Awal Juni sampai 30 Agustus
- 1170 | 30 Agustus sampai akhir Oktober
- 1171 | Januari - Mei: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan sebelum kedatangan UNAMET
- 1173 | Peningkatan kekerasan terkoordinasi pada April 1999: Pembunuhan-pembunuhan di Liquiça, Cailaco, dan Dili
- 1175 | **Boks: Seorang korban yang selamat dari pembantaian di Gereja Liquiça**
- 1180 | Pembunuhan di Distrik Covalima, Ermera, Manufahi pada April 1999**
- 1182 | Menjadikan aktivis prokemerdekaan, anggota CNRT, pelajar, dan mahasiswa sebagai sasaran pembunuhan
- 1184 | Kematian dalam penahanan
- 1185 | Berbagai pembunuhan lainnya, Januari - Mei 1999
- 1187 | Juni - 30 Agustus: Pembunuhan di luar hukum sejak kedatangan UNAMET hingga Jajak Pendapat
- 1191 | 30 Agustus - Oktober: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan setelah Jajak Pendapat
- 1192 | Staf UNAMET Timor yang menjadi sasaran
- 1193 | Penyerangan kediaman Uskup dan tempat pengungsian lain di Dili
- 1195 | Pembantaian di Gereja Suai
- 1197 | **Boks: Feliciano Cardoso, saksi pembantaian di Gereja Suai**
- 1198 | Mencari perlindungan polisi: Pembunuhan di kantor polisi Maliana
- 1201 | **Boks: Eksekusi di kantor polisi Maliana**
- 1203 | Institusi: Gereja dan pemuka agama menjadi sasaran
- 1203 | Pembunuhan dan penghilangan selama penarikan mundur Batalion 745

1205 | Komunitas yang menjadi sasaran: Pembunuhan di Mau-Nunu, Passabe, dan Maquelab

1207 | Pembunuhan massal di Passabe dan Maquelab, Oecussi

1210 | Pembunuhan massal lain

1211 | **Boks:** Kesaksian seorang anak yang selamat

1214 | Pembunuhan terhadap pengungsi di kamp-kamp dan di tempat lain di Timor Barat

1214 | **Belu**

1216 | **Timor Tengah Utara (TTU)**

1216 | Pembunuhan dan penghilangan lain pasca-pemungutan suara yang dilaporkan kepada Komisi

..... **1230** | Temuan-temuan

1231 | Konflik internal, 1974 - 1976

1232 | UDT

1233 | Fretilin

1235 | ABRI/TNI

1235 | ABRI, UDT, dan Apodeti

1236 | Pendudukan Indonesia, 1975 - 1999

1236 | Gerakan Resistansi

1239 | **1980 - 1999**

1240 | Pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantunya

1242 | **1975 - 1984**

1246 | **1985 - 1998**

1247 | **1999**

Daftar tabel:

- 860 | Tabel 1:** Rangkuman kesaksian komunitas lokal di enam desa selama konflik internal
- 890 | Tabel 2:** Para korban di sebelah Toko Lay, pagi 7 Desember 1975, yang dilaporkan kepada CAVR
- 890 | Tabel 3:** Para korban di rumah Li Nheu Ki, pagi 7 Desember 1975, yang dilaporkan kepada CAVR
- 891 | Tabel 4:** Warga etnis Cina lainnya yang terbunuh pagi 7 Desember 1975, yang dilaporkan kepada CAVR
- 895 | Tabel 5:** Korban yang berhasil diidentifikasi dari Gedung Assistencia, Caicoli, yang dilaporkan kepada Komisi
- 898 | Tabel 6:** Korban yang berhasil diidentifikasi di sekitar Matadouro pada 7 – 8 Desember 1975, yang dilaporkan pada Komisi
- 901 | Tabel 7:** Korban pembunuhan atau yang terakhir terlihat di pelabuhan pada 8 Desember 1975, yang teridentifikasi dan dilaporkan kepada Komisi
- 905 | Tabel 8:** Etnis Cina yang menghilang dan diduga telah dieksekusi di pelabuhan, 8 Desember 1975, yang dilaporkan kepada Komisi
- 907 | Tabel 9:** Korban yang berhasil diidentifikasi dari kejadian 8 Desember 1975 di Ailok Laran, yang dilaporkan kepada Komisi
- 909 | Tabel 10:** Warga sipil yang dibunuh dan mayatnya ditemukan di Dili, 7-10 Desember 1975, yang dilaporkan kepada Komisi
- 910 | Tabel 11:** Total jumlah warga sipil yang dibunuh atau dieksekusi, dari 7-10 Desember 1975, seperti dilaporkan kepada Komisi
- 945 | Tabel 12:** Orang-orang yang dilaporkan telah berada dalam tahanan sebelum dihilangkan/dibunuh
- 949 | Tabel 13:** Pembunuhan dan penghilangan di Quelicai 1978-1979
- 959 | Tabel 14:** Pembunuhan di Lautém 1978-79 menurut subdistrik dan kelompok
- 975 | Tabel 15:** Pembunuhan di luar hukum dan pemindahan paksa di Distrik Manufahi, 1978 - 1979
- 994 | Tabel 16:** Orang yang dilaporkan kepada CAVR telah dibunuh/dihilangkan setelah penahanan di Uatolari, Nov-Des 1978 dan Mar-Apr 1979
- 1002 | Tabel 17:** Pembunuhan di Distrik Manatuto, Februari-April 1979
- 1042 | Tabel 18:** Orang-orang yang dilaporkan telah dibunuh atau “dihilangkan” setelah serangan 10 Juni
- 1063 | Tabel 19:** Orang sipil yang dibunuh atau dihilangkan dari Ainaro dan Manufahi, 1982, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1067 | Tabel 20:** Orang-orang yang dibunuh di wilayah Kraras, September 1983, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1068 | Tabel 21:** Orang sipil yang dibunuh di Caraubalau, Viqueque, 16 September 1983, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1070 | Tabel 22:** Orang sipil yang dieksekusi di Tahu Bein, Viqueque, 17 September 1983, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1072 | Tabel 23:** Eksekusi dan penghilangan di wilayah Kraras, 1983, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1074 | Tabel 24:** Orang-orang yang dieksekusi dan hilang di Viqueque, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR

- 1078** | **Tabel 25:** Orang-orang yang dieksekusi di Iliomar, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1081** | **Tabel 26:** Orang-orang yang dieksekusi di Mehara, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1083** | **Tabel 27:** Orang-orang yang dibunuh di Lore, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1084** | **Tabel 28:** Orang-orang yang dieksekusi atau hilang di Lospalos, 1983, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1087** | **Tabel 29:** Orang-orang yang dieksekusi di Muapitine, Desember 1983, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1088** | **Tabel 30:** Orang-orang yang dieksekusi/hilang dari kecamatan Luro, 1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1088** | **Tabel 31:** Pelanggaran mematikan dan penghilangan di Lautém, Agustus 1983-Maret 1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1089** | **Tabel 32:** Orang-orang yang dihilangkan dari Desa Ossoala, 23 September 1983, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1091** | **Tabel 33:** Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan dari Baucau, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1093** | **Tabel 34:** Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan dari tahanan di Dili, 1983-1984, seperti yang dilaporkan kepada CAVR
- 1094** | **Tabel 35:** Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan dari Aileu, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1095** | **Tabel 36:** Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan dari Manufahi, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1096** | **Tabel 37:** Orang-orang yang dieksekusi di Ainaro, 1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1098** | **Tabel 38:** Nama-nama orang yang dieksekusi atau dihilangkan dari Koramil Bobonaro, 1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1100** | **Tabel 39:** Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan di Distrik Covalima dan Bobonaro, 1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1101** | **Tabel 40:** Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan di Liquiça, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1104** | **Tabel 41:** Ringkasan pelanggaran fatal acak terhadap penduduk sipil di wilayah Timur, 1985-1989
- 1105** | **Tabel 42:** Ringkasan pelanggaran fatal sembarang terhadap penduduk sipil di wilayah Timur, 1985 – 1989
- 1138** | **Tabel 43:** Ringkasan dakwaan dan hukuman terhadap sepuluh personel keamanan terkait peristiwa Santa Cruz
- 1150** | **Tabel 44:** Pelanggaran fatal dan penghilangan warga sipil yang dilakukan ABRI, 1990-1994, sebagaimana dilaporkan kepada CAVR
- 1150** | **Tabel 45:** Pelanggaran fatal dan penghilangan warga sipil yang dilakukan ABRI, 1994-1998, sebagaimana dilaporkan pada CAVR
- 1158** | **Tabel 46:** Warga sipil dan Hansip/TBO yang dibunuh oleh Fretilin/Falintil, 1980-1984, yang dilaporkan pada CAVR
- 1160** | **Tabel 47:** Warga sipil dan Hansip/TBO yang dibunuh oleh Fretilin/Falintil, 1985-1989, yang dilaporkan pada CAVR

- 1165** | **Tabel 48:** Warga sipil dan Hansip yang dibunuh oleh Fretilin/Falintil, 1990-1999, yang dilaporkan pada CAVR
- 1170** | **Tabel 49:** Pembunuhan dan penghilangan terhadap penduduk sipil oleh milisi dan TNI, 1999, yang dilaporkan kepada CAVR
- 1171** | **Tabel 50:** Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh TNI dan kelompok-kelompok milisi secara bersama-sama, Januari-Maret, Mei 1999, Distrik Bobonaro
- 1172** | **Tabel 51:** Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi secara bersama-sama, Januari-Maret, Mei 1999, Distrik Bobonaro
- 1173** | **Tabel 52:** Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi, Januari-Mei 1999, Distrik Covalima
- 1185** | **Tabel 53:** Pembunuhan di luar hukum yang dilaporkan kepada Komisi, Januari-Mei 1999
- 1188** | **Tabel 54:** Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi, Juni hingga 30 Agustus 1999
- 1217** | **Tabel 55:** Rangkuman kasus pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa sejak 1999 yang dilaporkan kepada komisi
- 1241** | **Tabel 56:** Perkiraan jumlah pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan Indonesia dan para pasukan pembantunya

Daftar grafik:

- 856** | **Grafik 1:** Pembunuhan yang dilaporkan, berdasarkan institusi pelaku dan institusi korban, 1975-1976
- 1230** | **Grafik 2:** Total pembunuhan yang terdokumentasi di Timor-Leste

Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa 7.2.

Pendahuluan

1. Komisi memperkirakan bahwa sekitar 18.600 pembunuhan di luar hukum dan penghilangan terjadi dalam seluruh periode yang menjadi mandatnya. Mayoritas terbesarnya dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia. Proporsi dari seluruh jumlah pembunuhan dan penghilangan yang terkait dengan pasukan keamanan Indonesia meningkat terus dalam tahun-tahun pendudukan, walaupun mulai pertengahan 1980-an angka mutlaknya menurun dalam hampir semua tahun sampai 1999.

Definisi

2. Pencabutan sewenang-wenang kehidupan manusia dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional.^{*} Bahkan saat keadaan darurat mengancam kehidupan suatu bangsa, berbagai kewajiban dalam hal hak hidup samasekali tidak dapat dihambat (“dihapuskan”).[†] Hak orang untuk tidak secara sewenang-wenang dicabut hak hidupnya juga berlaku dalam konflik bersenjata. Dalam konflik semacam itu, persoalan apakah pencabutan nyawa itu sewenang-wenang ditentukan dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum kemanusiaan internasional.[‡] Untuk keperluan bab ini, yang paling penting dari ketentuan-ketentuan ini adalah sebagai berikut:

- Pembunuhan dengan sengaja terhadap orang sipil selalu dilarang
- Dilarang secara sengaja membunuh petempur (*combatant*) yang tidak sedang ambil bagian dalam pertempuran karena mereka terluka atau sakit, telah tertangkap, atau meletakkan senjata

^{*} Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 3; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 6; dan hukum kebiasaan: lihat Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum 24, paragraf 8.

[†] Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 4(2); Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum 6, paragraf 1.

[‡] Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons, (1996) ICJ Reports 226 pada 240.

3. Dalam bab ini, Komisi menggunakan istilah tertentu untuk menyebut pelanggaran-pelanggaran yang dibahas. Istilah ‘pembunuhan di luar hukum’ atau ‘pembunuhan tidak sah’ digunakan secara bergantian untuk menyebut setiap pembunuhan disengaja yang melanggar hak atas hidup yang disebutkan di atas. Agar ringkas, bab ini menggunakan istilah ‘eksekusi’ atau ‘pembunuhan’ dengan makna yang sama.

4. Istilah ‘pembunuhan massal’ dan ‘pembantaian’ juga digunakan dalam bab ini. Komisi mendefinisikan ‘pembunuhan massal’ sebagai pembunuhan lima orang atau lebih yang secara khusus telah menjadi sasaran secara perorangan, dilakukan di satu tempat, dan sebagai bagian operasi tunggal di mana korbannya tidak bisa membela diri. ‘Pembantaian’ didefinisikan oleh Komisi sebagai pembunuhan sembarang terhadap lima orang atau lebih, yang dilakukan di satu tempat dan sebagai bagian operasi tunggal di mana korbannya tidak bisa membela diri. Penggunaan istilah ‘sembarang’ dalam definisi ini tidak berarti bahwa kelompok yang menjadi sasaran penyerangan dipilih secara acak sepenuhnya, tetapi yang dimaksudkan ialah bahwa orang-orang di dalam kelompok yang dijadikan sasaran tidak dipilih secara orang per orang. Jadi, dalam sejumlah pembantaian yang dikemukakan dalam bab ini, seperti pembantaian yang terjadi setelah Insiden Kraras Agustus 1983, Pembantaian Santa Cruz 12 November 1991, dan Pembantaian Gereja Suai September 1999, para penyerang bertindak secara sembarang bukan dalam arti bahwa tindakan mereka tidak diarahkan pada satu kelompok orang tertentu atau tidak dipicu oleh peristiwa tertentu, tetapi hanya dalam pengertian bahwa pembunuhan itu tidak diarahkan pada orang-orang tertentu di dalam kelompok yang diserang.

5. Meskipun ‘pembantaian’ yang didefinisikan dengan cara ini bukan merupakan satu pelanggaran tersendiri terhadap ketentuan tertentu hukum internasional (sesungguhnya ini adalah sekelompok pelanggaran), Komisi menganggap penting untuk menyebutkan mengenai pembantaian karena kejadian-kejadian pembantaian tersebut menunjukkan skala dan keseriusan pembunuhan jenis ini.

6. Komisi mengadopsi rancangan definisi mengenai penghilangan paksa yang digunakan oleh Kelompok Kerja PBB mengenai Rancangan Instrumen yang Berkekuatan Hukum Mengikat untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.^{*} Sesuai dengan itu, Komisi mendefinisikan ‘penghilangan paksa’ sebagai:

Penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk lain pencabutan kebebasan yang dilakukan oleh agen-agen Negara atau oleh orang atau kelompok orang yang bertindak dengan pengesahan, dukungan, atau pengetahuan Negara, yang diikuti dengan penolakan untuk mengakui

^{*} Definisi tersebut tetap menjadi titik ketidaksepakatan dalam pembahasan-pembahasan Kelompok Kerja, tetapi sumber ketidaksepakatannya adalah apakah definisinya harus diperluas agar mencakup aktor-aktor bukan Negara yang tidak mendapatkan wewenang, dukungan, atau pengetahuan dari Negara. Karena penghilangan di Timor-Leste tidak dilakukan oleh orang-orang seperti itu, kesulitan ini tidak berpengaruh pada penggunaan definisi Kelompok Kerja itu oleh Komisi.

pencabutan kebebasan, atau dengan penyembunyian mengenai nasib atau keberadaan orang yang hilang, yang dengan demikian menempatkan orang tersebut di luar perlindungan hukum.[†]

7. Melakukan penghilangan paksa dilarang oleh hukum internasional.[‡] Deklarasi PBB mengenai Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa menyebutkan bahwa tidak seorangpun boleh dihilangkan paksa, dan tidak ada keadaan perkecualian apa pun, baik itu perang, ancaman perang, ketidakstabilan dalam negeri, atau keadaan darurat lain, yang bisa dijadikan pembenaran untuk penghilangan paksa.[§] Negara-negara diwajibkan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mencegah penghilangan paksa orang dan harus menyelidiki dan mengadili penghilangan jika terjadi.[¶] Selain melanggar hak untuk hidup, penghilangan melanggar hak korban atas kebebasan dan keamanan pribadi, untuk bebas dari penyiksaan dan penganiayaan, untuk diperlakukan secara berperikemanusiaan ketika kebebasannya dicabut, dan untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.[¶] Penghilangan bisa juga “menyebabkan penderitaan kejiwaan pada sanak-saudara korban, yang merupakan pelanggaran terhadap larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan, atau merendahkan martabat.”^{**}

8. Penentuan khusus terhadap penghilangan yang muncul dari ketidakpastian mengenai nasib korban dan penderitaan yang ditimbulkan pada orang-orang yang dekat dengan korban juga diakui dalam rancangan deklarasi PBB, yang menyatakan bahwa “tindakan-tindakan yang merupakan penghilangan paksa harus dianggap sebagai pelanggaran yang berlanjut selama pelakunya tetap menyembunyikan nasib dan keberadaan orang-orang yang hilang, dan selama tindakan-tindakan ini tetap belum dijelaskan.”

9. Dalam praktik, pembedaan antara eksekusi dan penghilangan sering tidak tegas dalam masa konflik bertahun-tahun di Timor-Leste. Dalam pelaksanaan penelitiannya, Komisi kadang-kadang memperoleh kesaksian ganda mengenai kasus yang sama, dengan satu orang bersaksi bahwa korban telah hilang, sementara

.....
* Kertas kerja disusun oleh Ketua Kelompok Kerja untuk menyusun satu rancangan instrumen normatif yang berkekuatan hukum mengikat untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa, pada akhir sidangnya yang ke-4 (31 Januari-11 Februari 2005), E/CN.4/2005/CRP.4, 7 Maret 2005, Pasal 1.

† Deklarasi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, Resolusi Majelis Umum 47/133, 18 Desember 1992, Pasal 2.

‡ Kertas kerja disusun oleh Ketua Kelompok Kerja untuk menyusun satu rancangan instrumen normatif yang berkekuatan hukum mengikat untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa, pada akhir sidangnya yang ke-4 (31 Januari-11 Februari 2005), E/CN.4/2005/CRP.4, 7 Maret 2005, Pasal 3.

§ Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum 6, paragraf 4; Deklarasi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, Resolusi Majelis Umum 47/133, 18 Desember 1992, Pasal 3 dan 4.

¶ *Jegatheeswara Sarma vs Sri Lanka* (2003) HRC Communication No. 950/2000 paragraf 9.3; Deklarasi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, Resolusi Majelis Umum 47/133, 18 Desember 1992, Pasal 1(2).

** *Quinteros vs. Uruguay* (1983) HRC Comm. No. 107/1981 paragraf 14; *Jegatheeswara Sarma vs Sri Lanka* (2003) HRC Communication No. 950/2000 paragraf 9.5.

saksi yang lain mengatakan, berdasarkan akses yang lebih langsung terhadap peristiwanya, bahwa orang yang bersangkutan telah dibunuh. Tapi baik apakah korbannya dikatakan telah dibunuh maupun hilang, ada ciri yang sama dalam kasus-kasus ini dan yang menjadi sebab penderitaan mendalam sanak-saudara dan teman, yaitu bahwa jenazah korban tidak ditemukan. Sanak-saudara orang hilang yang memberikan kesaksian kepada Komisi, sebagian dari mereka dikutip dalam bab ini, sering mengungkapkan penderitaan yang disebabkan oleh kenyataan bahwa mungkin saja ada orang-orang yang bisa menunjukkan di mana mayat-mayat dibuang dan yang bisa membantu menemukan mereka kembali.

Metodologi

10. Untuk mendapatkan gambaran akurat mengenai pembunuhan dan penghilangan yang terjadi di Timor-Leste selama konflik, Komisi menggunakan sejumlah pendekatan berikut:

- Komisi mengumpulkan 7.669 pernyataan naratif dari 13 distrik di Timor-Leste dan dari para pengungsi yang tinggal di Timor Barat. Para deponen dalam proses pengambilan pernyataan Komisi melaporkan seluruhnya 5.120 pembunuhan dan 835 penghilangan.
- Pada tahap awal tugasnya, Komisi menyelenggarakan konsultasi di setiap subdistrik untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang melibatkan pelanggaran besar hak asasi manusia. Dalam konsultasi ini, banyak orang berbicara mengenai pembantaian dan pembunuhan yang terjadi dalam komunitas mereka. Berdasarkan informasi ini dan sumber-sumber lainnya, staf Komisi melakukan hampir 1.000 wawancara dengan saksi dan orang-orang yang selamat dari pembunuhan dan penghilangan di ketigabelas distrik.
- Tujuh belas korban dan dua saksi ahli memberikan kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian yang diselenggarakan di Dili pada 19 – 23 Desember 2003. Orang-orang yang selamat bisa menguraikan kekejaman yang mereka saksikan atau alami dalam konflik selama 25 tahun itu. Sebagian memberikan rekomendasi kepada Komisi mengenai bagaimana menjamin agar pelanggaran berat ini tidak akan pernah terjadi lagi.
- Komisi mengadakan diskusi di tingkat masyarakat di 216 desa untuk mendokumentasikan pengalaman kolektif masyarakat mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam diskusi-diskusi tersebut, orang-orang berbicara mengenai pembunuhan dan penghilangan yang terjadi di desa masing-masing.
- Komisi, bersama pakar statistik, menyelenggarakan proyek khusus untuk memperkirakan jumlah seluruh kematian yang disebabkan oleh semua hal, termasuk pembunuhan, dalam masa konflik. Proyek ini terdiri atas dua pengumpulan informasi: sensus batu nisan yang bertanda dan tidak bertanda yang ditemukan di 492 perkuburan di seluruh negeri (Basisdata Sensus Batu Nisan, *Graveyard Census Database* – GCD); dan survei terhadap 1.322 rumah tangga yang dipilih secara acak, mengenai kematian

dan perpindahan keluarga mereka di masa konflik (Survei Kematian Retrospektif, *Retrospective Mortality Survey* – RMS). Dalam survei ini, para responden diminta menyebut dengan spesifik sebab dari kematian, yang bisa mencakup pembunuhan. Untuk sampai pada perkiraan mengenai angka jumlah kematian, Komisi menggabungkan data dari GCD dengan data yang dikumpulkan melalui proses pengambilan pernyataan.*

- Komisi juga menerima submisi mengenai topik ini. Misalnya, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB memberikan satu penelitian penting mengenai kekerasan yang terjadi pada 1999. Komisi juga punya akses ke data yang dikumpulkan oleh organisasi-organisasi nonpemerintah hak asasi manusia internasional dan nasional mengenai pembunuhan dan penghilangan sepanjangan periode konflik.

11. Analisis dalam bab ini didasarkan pada analisis kuantitatif atas data yang dikumpulkan oleh Komisi dalam proses pengambilan pernyataan; dari Basisdata Sensus Batu Nisan dan Survei Kematian Retrospektif; serta pada wawancara yang dilakukan oleh Komisi dengan para saksi dan, kadang-kadang, dengan para pelaku; dan juga berdasarkan pada sumber-sumber sekunder. Sementara Komisi menggunakan data kuantitatif untuk memperjelas pola-pola penting kekerasan yang telah terjadi dalam suatu waktu dan ruang, diakui bahwa suatu pemahaman yang menyeluruh mengenai pembunuhan yang terjadi di Timor-Leste selama periode mandat mengharuskan pembunuhan-pembunuhan itu ditempatkan dalam konteks kejadiannya dan hal ini hanya bisa dilakukan melalui wawancara-wawancara yang dilakukan untuk itu.

Tinjauan kuantitatif

12. Berdasarkan analisis kuantitatifnya, Komisi menemukan bahwa sekitar 18.600 pembunuhan tidak sah dan penghilangan paksa terhadap orang Timor-Leste yang bukan petempur dilakukan antara 1974 dan 1999, yang mayoritas besarnya, 70%, dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, termasuk kesatuan Timor-Leste pembantunya.† Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa dilakukan baik oleh gerakan Resistansi maupun pasukan keamanan Indonesia. Profil temporal dari pembunuhan dan penghilangan yang berkaitan dengan gerakan Resistansi

* HRDAG (Human Rights Data Analysis Group, Kelompok Analisis Data Hak Asasi Manusia) adalah satu divisi dari Benetech Inc. di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Staf HRDAG terdiri atas pakar statistik, pemrogram komputer, dan pakar *record linkage*. Anggota-anggota tim HRDAG bekerja dalam proyek-proyek dokumentasi dan analisis hak asasi manusia skala besar di lima negara, di lebih daripada seluruh negara selama lebih daripada 20 tahun terakhir. HRDAG telah bekerja dengan komisi-komisi kebenaran di Haiti, Afrika Selatan, Guatemala, Peru, Ghana, dan Sierra Leone; dengan Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia; dan dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia nonpemerintah di El Salvador, Kamboja, Guatemala, Kolombia, Afghanistan, Sri Lanka, dan Iran. Untuk informasi lebih lanjut lihat <http://www.hrdag.org>.

† Kesatuan pembantu terdiri atas 'pertahanan sipil' (mencakup Hansip, Wanra, dan Kamra), pegawai-pegawai pemerintah daerah yang bertugas dalam peran "keamanan", kelompok-kelompok paramiliter (seperti Tonsus dan berbagai "Tim" yang merupakan pendahulu dari kelompok-kelompok milisi yang dibentuk pada 1998-1999), dan kelompok-kelompok milisi itu sendiri.

sangat berbeda dengan profil pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia. Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan dilakukan oleh anggota-anggota Resistansi sangat terkonsentrasi pada tahun-tahun awal konflik, terutama pada waktu dan sesudah konflik antarpantai yang dikenal sebagai “perang saudara” dan pada waktu pembersihan internal partai Fretilin pada 1976 dan 1977 – 1978. Sementara 49,0% (561/1.145) dari semua pembunuhan dan penghilangan pada 1975 yang didokumentasikan dilakukan oleh Fretilin/Falintil, persentasenya menurun tajam (meskipun pada 1976 – 1984 angka mutlak pembunuhan dan penghilangan tidak turun) pada periode-periode sesudahnya, menjadi 16,6% (563/3.398) pembunuhan dan penghilangan pada 1976 – 1984, sampai 3,7% (18/488) pada 1985 – 1998, dan 0,6% (5/898) pada 1999. Sementara itu, ada peningkatan dalam persentase pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan pasukan Timor-Leste pembantunya.

Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh Resistansi

13. Komisi tidak berusaha mengecilkan pelanggaran yang dilakukan oleh Resistansi. Pada tahap awal konflik banyak tokoh senior dalam kepemimpinan politik dan militer Resistansi bertindak dengan kekejaman yang luarbiasa tidak hanya terhadap musuh politik mereka tetapi juga terhadap penduduk sipil biasa. Tetapi, dalam dasawarsa 1980-an dan 1990-an, bukti kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa jumlah pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan Resistansi menurun tajam. Selain itu, karena sejumlah sebab, Komisi sering sulit memastikan bahwa Resistansi senantiasa memikul tanggung jawab kelembagaan untuk pembunuhan tidak sah dan penghilangan yang dituduhkan kepadanya. Karena masyarakat Timor-Leste menjadi sangat termiliterisasi pada periode ini, status banyak orang sipil yang dibunuh oleh Fretilin/Falintil sering tak jelas. Yang lebih lanjut memperumit penentuan pertanggungjawaban adalah kenyataan bahwa korban termasuk orang-orang yang secara paksa dihadapkan pada risiko oleh pasukan keamanan Indonesia. Lebih jauh, khususnya dalam serangan bersenjata, juga tidak selalu jelas dari informasi yang tersedia bahwa korban tertentu dijadikan sasaran secara khusus. Terakhir, setidaknya pada sebagian kasus, khususnya pada 1999 tetapi tidak terbatas padanya, Komisi memperoleh keterangan yang bisa dipercaya, termasuk dari orang-orang yang telah dikecam karena tindakan mereka, bahwa Komando Tinggi Falintil tidak secara kelembagaan mendukung pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia

14. Sebaliknya, tentara Indonesia secara konsisten melakukan pembunuhan dan penghilangan dalam seluruh periode pendudukan atas Timor-Leste. Konsistensi ini merupakan indikasi bahwa pembunuhan dan penghilangan memiliki tujuan

strategis, yaitu mengenyahkan penentangan terhadap pendudukan dengan cara menyor penduduk. Sifat umum pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, metode-metode spesifik yang mereka gunakan, dan impunitas yang diperoleh para pelaku pembunuhan dan penghilangan itu adalah indikasi lainnya.

15. Sifat dan skala pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia berubah-ubah sepanjang waktu ketika pendudukan Indonesia atas Timor-Leste dan resistansi terhadapnya berubah melalui berbagai tahapan. Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia mencapai puncaknya pada 1975 – 1979, 1983 – 1984, dan 1999. Tapi, sementara antara 1975 dan 1999 ada tahun-tahun saat pembunuhan relatif sedikit terjadi, kenyataan bahwa masa awal dan akhir pendudukan juga merupakan tahun-tahun saat pembunuhan dan penghilangan mencapai puncaknya mungkin merupakan indikasi bahwa sepanjang masa pendudukan, pasukan keamanan Indonesia secara konsisten siap melakukan eksekusi.

16. Pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia bersifat sangat mengerikan. Metode-metode yang digunakan mulai dari kematian karena pengucilan parah dalam sel penjara tanpa makan-minum, sampai eksekusi di depan umum dengan menggunakan kekejaman yang ekstrem, yang kadang memaksa penduduk desa untuk terlibat, sampai kepada pembunuhan di tempat-tempat yang konon dirahasiakan tapi kenyataannya menjadi dikenal luas, sampai penembakan sembarang terhadap sejumlah besar orang di tempat-tempat tertutup.

17. Kenyataan bahwa pembunuhan-pembunuhan itu sering terjadi di depan umum memberikan bukti yang kuat bahwa praktik-praktik tersebut bersifat sistematis dan diterima di dalam militer Indonesia, diperintahkan atau didukung oleh para perwira tinggi. Para pelaku langsung dan komandan mereka mendapatkan impunitas yang nyaris penuh untuk tindakan mereka.

18. Dalam tahun-tahun setelah invasi, pasukan Indonesia terlibat dalam operasi-operasi untuk menguasai wilayah, awalnya dengan menduduki kota-kota dan desa yang strategis, dan kemudian dengan menghancurkan basis-basis Resistansi di pedalaman dan memaksa penduduk sipil di bawah kontrol Fretilin memasuki kamp-kamp pemukiman yang dikontrol Indonesia. Komisi menerima banyak laporan bahwa dalam tahap konflik ini pasukan Indonesia membunuh orang-orang bukan petempur. Kadang-kadang yang terbunuh dicap sebagai anggota Fretilin, tetapi banyak dari korban pembunuhan ini adalah penduduk sipil yang dijadikan sasaran secara acak. Penduduk sipil biasa dijadikan sasaran dalam berbagai situasi lainnya: ketika mencari bahan makanan atau pergi untuk mengerjakan kegiatan sehari-hari, ketika bertemu pasukan keamanan Indonesia yang sedang beroperasi, sebagai pembalasan atas serangan Falintil, dan dicurigai berhubungan dengan atau mengetahui keberadaan Fretilin/Falintil.

19. Ketika terlibat dalam serangan terhadap basis-basis dan posisi Fretilin/Falintil, dan setelah terjadinya operasi-operasi tersebut, pasukan keamanan

Indonesia membunuh para warga sipil dan orang lainnya yang tidak terlibat dalam pertempuran, termasuk para petempur yang menyerah dan tertangkap. Mayoritas laporan jenis ini yang diterima Komisi berhubungan dengan periode 1977 – 1979, saat banyak orang yang telah melarikan diri ke gunung dan kemudian jatuh ke tangan tentara Indonesia karena menyerah atau tertangkap, segera dibunuh. Komisi menerima keterangan yang menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran jenis ini terus dilakukan dalam operasi-operasi selanjutnya, seperti dalam Operasi Kikis Juni – September 1981.

20. Pada tahun-tahun awal pendudukan, khususnya pada 1978 – 1979 dan 1983 – 1984, para komandan, pasukan ABRI, dan kesatuan-kesatuan pembantunya melakukan pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa secara sistematis dan meluas terhadap orang-orang yang merupakan anggota aktif Resistansi dan orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan klandestin dengan para anggota Fretilin/Falintil yang masih berjuang.

21. Sepanjang masa pendudukan, tetapi khususnya pada awal dasawarsa 1980-an, para komandan, pasukan, dan kesatuan-kesatuan pembantu ABRI melakukan pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa terhadap para warga sipil untuk menghukum masyarakat yang dicurigai mendukung pasukan Falintil. Penghukuman tanpa pandangbulu terhadap orang-orang yang diketahui sebelumnya terlibat dalam gerakan Resistansi dan penghukuman kolektif terhadap masyarakat sangatlah keras terutama setelah terjadinya serangan Falintil terhadap pasukan dan sasaran militer Indonesia, seperti yang terjadi di Dili pada Juni 1980, di Mau Chiga dan sekitarnya (Hato Builico, Ainaro) pada Agustus 1982, dan di Kraras (Viqueque) pada Agustus 1983.

22. Pada periode 1985 – 1998 jumlah pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh ABRI dan kesatuan-kesatuan pembantunya relatif menurun dibandingkan tahun-tahun awal pendudukan. Dalam periode 1985 – 1998, di luar Pembantaian Santa Cruz, Komisi menerima laporan-laporan mengenai 250 pembunuhan dan penghilangan, kurang daripada 20 per tahun. Tapi, ada yang berlanjut dari masa lalu. Pasukan keamanan Indonesia terus membunuh dan menyebabkan penghilangan warga sipil yang berhubungan atau dicurigai berhubungan dengan kelompok-kelompok yang melawan pendudukan, termasuk anggota-anggota Fretilin/Falintil, jaringan bawahan, dan kelompok-kelompok prokemerdekaan lainnya. Seperti dalam tahun-tahun awal, dalam periode ini pasukan keamanan Indonesia juga terus melakukan pembunuhan acak terhadap penduduk sipil yang secara paksa direkrut untuk operasi militer atau ketika mereka sedang keluar untuk melakukan kegiatan sehari-hari; dan melakukan pembunuhan balasan seperti setelah serangan Falintil di Alas (Manufahi) pada Oktober 1998. Sejalan dengan terjadinya perubahan dalam strategi Resistansi, Pasukan Keamanan Indonesia juga menjadikan para demonstran sebagai sasaran, yang paling terkenal adalah yang terjadi di Perkuburan Santa Cruz tetapi juga sebelum dan selama kunjungannya sejumlah duta besar Uni Eropa pada Juni 1997.

23. Pada 1999, pembunuhan dan penghilangan kembali mencapai tingkat yang selama itu tidak lagi terlihat sejak akhir dasawarsa 1970-an. Dalam beberapa hal, pembunuhan dan penghilangan itu memiliki kesamaan metode dan tujuan dengan

yang dilakukan pada tahun-tahun awal pendudukan, menjadikan sasaran para aktivis politik dan penduduk sipil yang lebih luas dengan tujuan mengintimidasi penduduk, kali ini agar memilih mendukung integrasi dengan Indonesia. Dalam dua hal, pembunuhan dan penghilangan ini berbeda dengan pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan pada tahap-tahap awal konflik. Yang pertama adalah diandalkannya oleh tentara Indonesia kesatuan-kesatuan pembantunya yang bertindak sendiri untuk melaksanakan serangan terhadap penduduk sipil. Kedua adalah bahwa setelah hasil pemungutan suara diumumkan, pembunuhan menjadi murni bersifat menghukum dan membalas dendam, terlepas dari tujuan apa pun.

Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa selama konflik internal: 11 Agustus – 24 September 1975

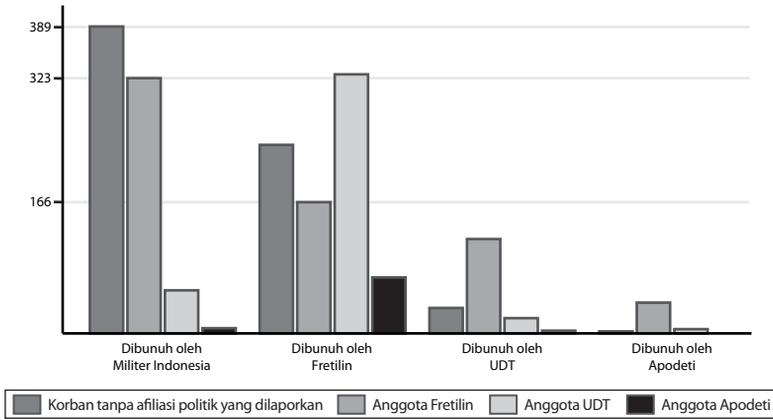
24. Komisi menerima laporan tentang pembunuhan 1.070 orang nonpetempur pada 1975. Dari jumlah itu, hanya 73,6% (787/1070) yang melaporkan bulan terjadinya peristiwa itu. Komisi menerima 348 pernyataan mengenai pelanggaran fatal yang terjadi pada Agustus dan September 1975, atau sekitar 44,2% (348/787) dari pernyataan yang melaporkan bulan terjadinya peristiwa itu. Relatif rendahnya jumlah kasus dengan informasi bulan yang dilaporkan kepada Komisi menunjukkan keterbatasan proses pengambilan pernyataan. Komisi percaya bahwa antara 1.500 sampai 3.000 orang meninggal selama konflik internal. Para pengamat ICRC melaporkan pada masa itu:

Nyawa manusia yang hilang sangat sulit ditentukan. Jumlah yang meninggal adalah... 3.000 orang untuk seluruh pulau. Mayoritas korban tampaknya adalah nonpetempur yang tampaknya telah terbunuh selama pertempuran di jalan-jalan atau dieksekusi sebagai balas dendam dari Fretilin maupun dari UDT. Yang ada di benak orang-orang ketika itu adalah balas dendam (perseteruan).*

25. Berdasarkan pernyataan yang dilaporkan kepada Komisi, grafik berikut ini menunjukkan pola pembunuhan di luar hukum, menurut kelompok pelaku dan kelompok korban, yang terjadi pada 1975 – 1976.

* Memorandum oleh A. Pasqueir kepada ICRC Jenewa dengan judul Komite Internasional Palang Merah, Operasi Pertolongan Timor Timur, Mengenai: Situasi di Timor, Laporan tentang aktivitas-aktivitas delegasi sejak 1 sampai 15 September. Tertanggal, Darwin, 16 September 1975.

Pembunuhan yang dilaporkan, berdasarkan institusi pelaku dan institusi korban, 1975-1976



Catatan: Setiap pembunuhan dihitung untuk setiap kelompok pelaku; tanggung jawab dapat dibagi antarkategori
 Sumber: Pernyataan yang diberikan kepada Komisi

26. Konflik internal Agustus – September 1975 terjadi dalam konteks ketegangan yang meningkat di antara partai-partai politik yang terbentuk pada akhir 1974. Setelah kegagalan koalisi UDT-Fretilin pada Mei 1975, kekacauan dan kekerasan politik pecah di berbagai komunitas di seluruh penjuru negeri. Beberapa pengaruh eksternal memicu kekerasan ini, termasuk sebuah kampanye destabilisasi terselubung oleh Indonesia yang dilancarkan dari Timor Barat dan ketidakpastian upaya Portugal untuk melaksanakan proses dekolonisasi. Partai-partai politik Timor-Leste sendiri mendorong permusuhan dan kekerasan di antara para pendukung mereka. Beberapa individu atau kelompok juga menggunakan konflik internal ini sebagai kesempatan untuk menyelesaikan perseteruan lama yang samasekali tidak terkait dengan konflik politik.¹

27. Dalam kesaksiannya di hadapan Komisi, Xanana Gusmão menjelaskan suasana meningkatnya kekerasan dan impunitas dalam bulan-bulan sebelum aksi bersenjata UDT pada Agustus:

Kita mengamati kurangnya kemauan di pihak pemimpin partai untuk mengurangi kekerasan, untuk menghadapi apa yang terjadi. Kadang-kadang kita amati ada partai-partai yang cukup senang ketika para pendukungnya datang dan berkata, “Kami memukuli orang ini” atau “Kami bunuh orang itu,” hal ini dianggap sebagai kemenangan kecil... Jika suatu partai memiliki pendukung terbanyak di suatu subdistrik, para pendukung ini tidak akan mengizinkan partai-partai lain berkampanye di wilayah tersebut. Maka ketika partai-partai lain pergi ke tempat-tempat tersebut, penduduk akan menyerang, menghalangi, memboikot, saling melemparkan batu, dan saling memukul.¹

¹ Lihat Bagian 3: Sejarah Konflik untuk keterangan terperinci tentang periode sebelum konflik internal bersenjata. Bagian latar belakang ini akan sekadar menyoroti beberapa elemen dalam konteks konflik internal.

Siaran-siaran radio: berpihak dan menghasut kekerasan

Komisi mencatat bahwa sebuah ciri mencolok dari kekerasan internal pada 1975 adalah penggunaan siaran radio oleh partai-partai politik untuk menganjurkan kekerasan dan menyebarkan kebencian. Selama Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal, para pemimpin Timor-Leste berkomentar tentang bagaimana kedua partai, baik UDT dan Fretilin menggunakan siaran radio untuk melakukan serangan pribadi dan terhadap partai-partai politik (yang singkat, dan) selama periode dekolonisasi yang singkat dan tentang kerusakan akibat serangan-serangan tersebut:

Domingos Oliveira, yang ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal UDT, mengingat bagaimana partai-partai yang saling bertentangan itu menggunakan radio untuk memfitnah satu sama lain setelah proses dekolonisasi mengizinkan pembentukan asosiasi-asosiasi politik:

Situasi semacam ini baru dimulai, tetapi sedikit menimbulkan kesulitan. Pertama, komunikasi seperti ini berasal dari radio, dari mahasiswa-mahasiswa Timor yang datang dari Portugal. Mereka berbicara keras terhadap UDT. Mereka mengatakan bahwa UDT ultrakonservatif, hanya mau mempertahankan situasi saja dan tidak menginginkan kemerdekaan... Hal ini tidak benar, sehingga UDT menanggapi. ASDT kemudian merespons dan timbullah kekacauan di antara kedua partai... Saya harus mengakui bahwa situasi pertentangan ini semakin memburuk... hubungan antara teman lama rusak... Hal yang seharusnya didiskusikan dengan tenang semakin menjadi tegang. Saya pikir ini berkaitan dengan kebudayaan kita orang Timor: kita bertengkar, kita ingin memukul satu sama lain, setelah itu kita memukul dahi kita sendiri dan berkata bagaimana ini bisa terjadi di tanah air kita... Kami saling menyerang menggunakan siaran radio.²

João Carrascalão, pemimpin UDT lainnya pada saat itu, membenarkan tentang penggunaan siaran radio untuk memicu kekerasan:

...[P]ada April 1975, kedua partai itu telah saling terpecah. Mereka saling menyerang. Mereka sudah saling melecehkan secara keras. Program-program radio hanya saling mencaci-maki, saling memprovokasi—“yang di sini ayam merah, yang di sana fasis, yang ini budak Indonesia”—saling mencaci-maki saja, selalu mencari api untuk menyalakan petir.³

Mari Alkatiri, seorang anggota Komite Sentral Fretilin saat itu, menegaskan sifat pribadi dari berbagai tuduhan melalui siaran radio:

*Begitu banyak hal yang menjadi tidak benar, karena hal ini atau hal itu. Kami tidak bisa mengontrol. Kami coba mengontrol tetapi tidak berhasil... setiap orang berbicara semau mereka... Radio Maubere hanya digunakan untuk menyebut orang. Saya sendiri harus pergi ke sana untuk mengontrol agar mereka tidak menyebut nama orang.*⁴

Mário Carrascalão, seorang pemimpin politik senior UDT pada saat itu, menggambarkan bagaimana serangan terhadap oposan politik lewat radio menjadi hambatan bagi dialog untuk mengatasi perbedaan:

*Saya pikir bahwa sesuatu yang menjadi masalah besar bagi kami adalah tidak adanya komunikasi. Orang tidak duduk bersama untuk berbicara. Tidak ada diskusi-diskusi. Tidak ada seorang pun yang mendorong adanya diskusi-diskusi. Pada saat itu tidak ada yang mempromosikan diskusi, hanya saling caci-maki lewat radio.*⁵

Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, mengingat bahwa setelah Gerakan 11 Agustus UDT dilaksanakan, radio menjadi alat yang penting untuk memicu kekerasan di seluruh wilayah:

*Siaran Radio Dili memerintahkan "UDT menyerang Bucoli". Siaran itu mengatakan: "Tangkap kaum Fretilin. Kejar mereka sampai dapat di Cairui, tangkap para Komunis." Saya pikir "Komunis apa?... Tidak mungkin semua Fretilin itu komunis... [s]ejak itu saya selalu mengikuti siaran radio setiap saat... Saya mendengar mereka mulai menyerang Aileu, Ermera, Letefoho. Orang-orang dari Atsabe datang dan menyerang Komite Sentral di Aileu. Orang-orang dari Turisca, Funar, Fatumakerek, Laclubar, Soibada, Barique, bergabung dan membentuk perang salib. Mereka mengatakan, "Perang ini adalah perang salib, perang melawan komunis." Perang ini diberkati oleh para pastor. Para pastor berkumpul dan mengadakan misa besar dan memberkati mereka..."*⁶

Komisi juga menerima kesaksian tentang bagaimana intelijen Indonesia juga mulai menggunakan siaran radio untuk menyebarkan propaganda dari Timor Barat. Domingos Oliveira mengatakan kepada Komisi bahwa informasi yang dikumpulkan oleh intelijen Indonesia dari seluruh wilayah Timor-Leste telah digunakan sebagai dasar untuk propaganda harian dari program siaran dari Kupang, Timor Barat:

*Program radio dari Kupang menuduh Fretilin sebagai komunis, menuduh UDT sebagai neokolonialis karena UDT ingin melanjutkan hubungan dengan Portugal... Apa pun yang dilakukan Fretilin, pada hari yang sama akan disiarkan lewat radio Kupang. Apa pun yang dilakukan UDT, pada hari yang sama akan disiarkan lewat radio Kupang.*⁷

Mari Alkatiri bercerita kepada Komisi tentang pesan-pesan dari siaran radio Kupang setelah "Percobaan Kudeta" oleh UDT pada 11 Agustus:

[Setelah kudeta] Indonesia mulai berpikir bahwa UDT sungguh-sungguh telah menang. Lalu radio Indonesia di Kupang menuduh UDT sebagai komunis pro-Soviet, dan Fretilin sebagai komunis pro-Cina. Bahwa semua orang adalah komunis... [K]omunis atau bukan komunis, Indonesia tetap akan masuk Timor-Leste. Bukan karena [apa yang dituduhkan dalam siaran] itu...⁸

28. Pada pertengahan 1975 ketegangan meningkat di antara partai-partai politik, ada penghasutan oleh semua pihak melalui siaran radio, dan kekacauan makin parah. Satu faktor kunci yang membuat meluasnya kekerasan, dari suatu percobaan kudeta menjadi konflik yang lebih besar, adalah kenyataan bahwa kedua partai mendistribusikan senjata kepada anggota sipil mereka. Mário Carrascalão menggambarkan bagaimana warga sipil dipersenjatai di seluruh Dili:

Ketika saya sampai di Dili [14 Agustus 1975], saya melihat bahwa hanya satu kelompok yang berkuasa, yaitu militer. Tidak ada komandan-komandan politik di Dili. Siapa yang memegang komando gerakan ini?... Saya tidak melihat arah politik apa pun untuk gerakan ini. Tidak ada arah politik dalam gerakan ini. Ini adalah gerakan militer. Anda dapat berkata bahwa massa mengikutinya... lelaki-lelaki tua dan anak-anak kecil di seluruh penjuru Dili membawa senjata...

Di daerah situasinya berbeda. Di daerah, para pemimpin UDT benar-benar memegang kendali. Saya kira ada jaringan dengan militer dan para komandan operasional. Saya tidak begitu tahu bagaimana nominasinya...

Di Palapaco {Motael, Dom Aleixo} markas UDT} saya mendapati lelaki-lelaki tua, anak-anak kecil, dan anak-anak muda... Anak-anak berusia 12 tahun membawa senjata-senjata. Saya melihat anak teman saya, 12 atau 13 tahun, membawa sebuah G-3...

Sebagian kecil senjata diambil dari administrasi-administrasi subdistrik. Fretilin mengambil beberapa, UDT mengambil beberapa. Tetapi sehubungan dengan jumlah senjata yang lebih banyak yang dimiliki UDT, saya sedang tidak berada di Dili namun saya mendengar informasi bahwa senjata-senjata itu berasal dari polisi di Dili.⁹

29. Bicara tentang hal yang sama, anggota Komite Sentral Fretilin, Mari Alkatiri, menggambarkan kekacauan akibat pembagian senjata yang tak terkendali:

Di Dili, Fretilin dan Apodeti bersama-sama menyerang UDT. Terjadi banyak kekacauan dan senjata-senjata dibagikan begitu saja tanpa suatu kriteria. Karena senjata-senjata telah dibagikan begitu saja tanpa kriteria, Komite Sentral [Fretilin] mengirim saya turun dari

Aileu [ke Dili] pada 20 atau 21 Agustus. Pada saat itu, waktu sarapan, semua anggota Fretilin dan Apodeti akan pergi ke Quartel untuk makan. Saya melekatkan secarik kertas di pintu agar orang-orang pergi sarapan. Mereka pergi makan dan berbaris dan semua orang [Apodeti] yang memiliki senjata dilucuti satu per satu.¹⁰

30. Situasi menjadi lebih buruk ketika banyak orang Timor anggota angkatan bersenjata Portugis mengabaikan netralitas mereka. Meski beberapa orang bergabung dan mendukung aksi UDT pada 11 Agustus, mayoritas mendukung Fretilin ketika Fretilin melancarkan reaksi bersenjata pada 20 Agustus. Ini sebagian adalah akibat dari kenyataan bahwa kedua partai politik itu telah lama mengincar para anggota militer untuk mendapatkan kesetiaan mereka. Mantan Letnan tropas, Rogério Lobato, kemudian mengingat:

Dapat saya katakan bahwa UDT membuat kampanye untuk memperoleh dukungan terutama dari lulusan sekolah militer, para sersan. Namun Fretilin juga membuat kampanye terbuka, tidak diam-diam, di antara pasukan-pasukan tersebut untuk memobilisasi para serdadu.¹¹

31. Persediaan senjata yang besar ada di Timor Portugis karena Portugal memegang hak penggunaan senjata NATO di wilayah ini. Portugal tidak terlibat dalam perang saudara, dan ini berarti partai-partai politik dengan mudah dapat menguasai persenjataan begitu para serdadu turut terlibat dalam konflik.

32. Tabel di bawah ini merangkum kesaksian kolektif komunitas lokal di enam desa selama konflik internal, seperti yang mereka utarakan dalam pertemuan komunitas yang diselenggarakan oleh Komisi :¹²

| Tabel 1: Rangkuman kesaksian komunitas lokal di enam desa selama konflik internal | |
|---|--|
| Komunitas | Rangkuman |
| Mulo, Hato Builico, Ainaro | <p>1975: Dua orang perwakilan Fretilin dari [subdistrik tetangga] Maubisse datang dan menyuruh perwakilan Fretilin setempat untuk menjual kartu kepada kami. Karena takut, kami membayar satu <i>escudo</i> untuk membeli sebuah kartu. Kemudian Fretilin menyuruh kami untuk menyapa satu sama lain dengan panggilan 'Camarada'. Itu menunjukkan bahwa kami sangat menghormati satu sama lain.</p> <p>Agustus 1975: Fretilin menaikkan benderanya di rumah seorang perwakilan di bawah klinik di Wisei, Dare, Desa Mulo (Hato Builico, Ainaro). Sejak saat itu, Dare mulai terbagi antara mereka yang tinggal di bagian bawah jalan [Fretilin] dan mereka yang tinggal di bagian atas jalan [UDT]. Seorang anggota Fretilin menahan dua orang katekis (guru agama) selama satu hari, dan selama itu mereka tidak mendapat makanan atau minuman, kemudian [ia juga] menangkap enam pendukung UDT lainnya. Mereka dibawa ke sekolah dasar Dare, di mana mereka dihukum.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Para pendukung UDT yang tinggal di Maubisse membuat rencana mengirim pasukan untuk masuk ke Mulo dari Nunu Mogue untuk menyelamatkan para tahanan UDT. Tak lama kemudian, Fretilin membawa 200 orang lelaki dari Maubisse “untuk membunuh kami semua.” Ketika kelompok Fretilin mencapai Tatiri, Mulo (Hatu Builico, Ainaro), seorang tokoh masyarakat membawa seekor kerbau untuk disembelih di Dare dan menyerukan agar permusuhan antara Fretilin dan UDT diakhiri.</p> <p>Setelah kelompok Fretilin makan, seorang kader Fretilin mengunjungi enam anggota UDT yang ditahan. “Kami, kaum perempuan, menangis karena kami kira keenam orang itu telah dibunuh, tapi ternyata belum.”</p> <p>Kemudian seorang pemimpin Fretilin meneruskan perjalanan ke Nunu Mogue, di mana dia menangkap dan membunuh seorang pendukung UDT, walaupun mayatnya tidak pernah ditemukan.</p> <p>Pasukan UDT dan <i>malae</i> [orang luar] kemudian pergi ke Dare dan menebas tiang bendera Fretilin.</p> |
| Kasabauk (ketika itu bernama Maudemo), Tilomar, Covalima | <p>1974: Kehidupan secara umum tenteram dan bahagia. Namun sang <i>Liurai</i>, Saneti, menghukum orang-orang yang tidak melakukan kerja di ladang.</p> <p>1975: Fretilin membagikan kartu anggota partai. Kader Fretilin setempat mengatakan kepada orang-orang bahwa lebih baik bergabung dengan Fretilin. Hanya dua orang yang bergabung dengan UDT, namun banyak orang bergabung dengan Apodeti. Setelah kudeta balasan Fretilin, orang-orang Apodeti ditangkap dan disuruh masuk Fretilin, dan beberapa orang direkrut ke dalam Falintil di Tilomar.</p> |
| Uaitame, Quelicai, Baucau | <p>1974: Ada dua partai di komunitas ini: Fretilin dan UDT.</p> <p>1975: Setelah kudeta UDT pada Agustus, pemimpin-pemimpin UDT setempat membawa sekitar 50 orang pendukung UDT ke Dili. Tidak ada tanggapan yang berarti dari anggota Fretilin di Uaitame setelah Reaksi Bersenjata Fretilin di Dili.</p> <p>11 September 1975: Pemimpin-pemimpin Fretilin berkunjung ke Quelicai untuk menyuruh para pendukungnya membentuk struktur-struktur sipil dan militer. Enam pemimpin UDT ditangkap oleh Fretilin dan dibawa ke kilang Descascadeira (sebuah tempat penahanan di kota Baucau), di mana mereka ditahan selama satu bulan.</p> |
| Orlalan/Batara, Laclubar, Manatuto | <p>1975: UDT menggunakan posisinya yang dominan untuk mengintimidasi orang-orang agar masuk ke dalam pasukan yang direkrut untuk menyerang basis Fretilin di Turisca, subdistrik tetangga. Para pendukung UDT dari Laclubar bergabung dengan pendukung UDT lainnya dari Soibada dan Barique dan membentuk pasukan yang beranggotakan 300 orang di Fatumakerek. Dari sana, mereka pergi untuk menyerang Turisca. Serangan mereka gagal, karena pasukan Fretilin bersenjata lebih baik.</p> <p>Fretilin dari Turisca (Manufahi) segera melancarkan serangan balik atas Laclubar. Pasukan Fretilin-Turisca merampas barang-barang milik penduduk dan ternak, membunuh sebagian di antaranya’ dan membawa sisanya ke Turisca. Mereka juga menangkap lima pemimpin partai UDT di Laclubar dan membawa mereka dalam keadaan terikat ke Turisca, di mana mereka kemudian dihukum. Hanya Raja Monis [sang <i>liurai</i>] yang kembali; yang lainnya dibunuh di Turisca.</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| Bibileo, (Viqueque, Viqueque) | <p>1974: Sekelompok mayoritas kecil orang lebih mendukung UDT dibanding ASDT/Fretilin dan Apodeti. Kartu anggota partai dibagikan di kantor kepala desa. Orang-orang merasa serbasalah tentang partai-partai itu.</p> <p>1975: Setelah Aksi Bersenjata UDT, semua orang mendukung UDT sebagai pemenang. Kemudian, setelah reaksi bersenjata Fretilin, penduduk terpecah menjadi dua kelompok: yang satu menunggu kedatangan pasukan Fretilin di Sukaer Oan, Caraubalu (Viqueque, Viqueque); dan yang satunya lagi menunggu di Natarbora. Setelah pasukan Fretilin memenangi perang saudara, orang-orang mendukung Fretilin.</p> |
| Saburai, Maliana, Bobonaro | <p>1974: Mayoritas penduduk bergabung dengan Fretilin, namun sang kepala desa adalah anggota UDT. Sebelum pembentukan partai-partai, sudah ada sentimen yang berkembang menentang kepala desa.</p> <p>11 Agustus 1975: Setelah Aksi Bersenjata UDT, semua pendukung Fretilin ditangkap dan ditahan di kantor kepala distrik sebelum dipindahkan ke Corluli (sebuah gedung di Maliana yang digunakan UDT sebagai penjara sesudah kudeta). UDT memerintahkan semua orang untuk pergi ke Kota Maliana.</p> <p>30 Agustus 1975: Pasukan (tentara Portugis) dari Skuadron Kavaleri 5, yang berbasis di Bobonaro, datang ke Maliana. Para pendukung UDT dan Apodeti diusir ke Timor Barat selama satu tahun. Sekitar 500 orang dari Dusun Masage pindah ke Tahon, Timor Barat. Beberapa orang disiksa, dibunuh, dan digantung. Sekitar 50 perempuan diperkosa. Banyak anak meninggal akibat penyakit.</p> <p>16 Oktober 1975: Pasukan Indonesia melintasi perbatasan di Memo (Akidiru Laran).</p> <p>17 Oktober 1975: Indonesia menguasai Maliana.</p> |

Pembunuhan di luar hukum sebelum aksi bersenjata UDT 11 Agustus

33. Komisi telah menerima kesaksian tentang beberapa pembunuhan selama dua minggu sebelum Gerakan 11 Agustus UDT. Beberapa pembunuhan ini dilakukan oleh Fretilin di Ermera dan sekitar Maubisse (Ainaro).¹³ Kasus-kasus ini tampaknya merupakan pembunuhan-pembunuhan yang tak saling berhubungan, dan mencerminkan ketegangan yang tumbuh di kedua daerah itu, di mana ada dukungan untuk kedua partai tersebut.

34. Komisi mendengar bukti menguatkan tentang pembunuhan massal 10 – 25 orang oleh pendukung Fretilin/Falintil di Desa Maulau (Maubisse, Ainaro) pada 7 Agustus 1975. Menurut suatu kesaksian kolektif kepada Komisi, masyarakat Maulau terpecah dalam hal kesetiaan politik mereka. Mereka mengingat serangkaian peristiwa yang berujung pada meletusnya kekerasan. Pada September 1974, sekelompok pendukung Fretilin bergerak ke subdistrik tetangga Turisca (Manufahi). Pada Januari 1975, terjadi pertentangan antara seorang pendukung UDT dan seorang perwakilan Fretilin pada sebuah upacara panen tradisional di Maulau. Pada Agustus 1975, ketegangan meningkat ketika seorang pemimpin Fretilin mengunjungi subdistrik-subdistrik sekitar, yakni Turisca (Manufahi) dan

Lequidoe (Aileu), dan dikatakan membuat pidato yang menghasut masyarakat. Pemimpin tersebut mendesak para pendukung Fretilin untuk “membersihkan duri-duri di Lumululi”—sebuah *aldeia* di Desa Maulau. Menurut masyarakat Maulau, hal ini akhirnya mengakibatkan terjadinya serangan oleh pendukung Fretilin dari Lequidoe, Turisca, dan Manumera (Turisca, Manufahi) pada 7 Agustus. Para penyerang menjadikan tiga *aldeia* sebagai sasaran, yakni Maleria, Lumoluli, dan Ussululi. Menurut kesaksian kolektif ini, banyak orang dibunuh, ratusan rumah dibakar, dan hewan-hewan ternak dijagal atau dicuri. Para pendukung UDT lari ke Maubisse, meninggalkan para orang tua dan anak-anak di Maulau.¹⁴

35. Komisi juga menerima kesaksian tentang pembunuhan di luar hukum oleh pendukung UDT. Pada 10 Agustus, seorang *delegado* Fretilin yang bernama Armando Barros dibunuh oleh pendukung UDT di Lisapat, Aifu (Hatolia, Ermera).¹⁵ Pada hari yang sama, seorang *delegado* Fretilin lainnya ditangkap dan ditahan oleh pendukung UDT di Gleno (Ermera). Pendukung UDT berupaya untuk membunuhnya, tapi dia bisa meloloskan diri.¹⁶

Pembunuhan pada 11 Agustus, hari aksi bersenjata UDT

36. Pada malam 10 Agustus, UDT melancarkan aksi bersenjata di Dili. Pada 11 Agustus terjadi gelombang pembunuhan di luar hukum di seluruh distrik tengah dan barat. Sebagian besar kasus ini dilakukan oleh anggota UDT di Liquiça dan Ermera.

Hari-hari kekacauan dan bentrokan bersenjata di Dili

Warga Dili menyaksikan langsung berbagai peristiwa seputar konflik bersenjata antara partai-partai politik pada Agustus 1975. Komisi mendengar anggota komunitas dari berbagai desa di Dili menyampaikan ingatan mereka mengenai masa itu.

Colmera (Vera Cruz, Dili)

Warga Colmera mengingat bahwa pada 11 Agustus 1975, tiga kompi pasukan UDT dari Baucau, Lospalos, dan Laclubar datang ke Dili. Bagian Barat Dili dikuasai oleh UDT, sedangkan para pemimpin Fretilin menarik diri ke daerah Mota Ulun di Bemori pada hari itu. Keesokan harinya, 12 Agustus 1975, para pemimpin Fretilin di Dili “meminta bantuan dari orang-orang Fretilin dan Komite Regional Fretilin di Aileu.” Pada 13 Agustus, sebuah kendaraan datang menjemput para pemimpin itu di Balibar untuk membawa mereka ke Aileu. Pada hari itu, para pendukung UDT membakar rumah Francisco Xavier do Amaral di Audian, menurunkan

bendera Fretilin, dan menangkap (pemimpin-pemimpin utama Fretilin). Pada 17 Agustus 1975, Fretilin menyerang Companhia de Instrução (pusat pelatihan militer Portugis di Aileu) dan mengambil persenjataan serta barang-barang lain. Pada 21 Agustus 1975, para pemimpin Fretilin telah membentuk sebuah komisi, bekerja bersama dengan organisasi perempuan dan organisasi pemuda, OPMT dan OPJT, untuk “melaksanakan kontrol dan membantu orang-orang yang membutuhkan makanan.” Menurut masyarakat Colmera:

Tidak ada makanan, dan semua orang lapar. Semua aktivitas ekonomi terhenti. Tidak ada kegiatan sekolah, tidak ada layanan kesehatan. Selama masa itu, kami hanya mendapatkan pertolongan medis di Lahane.¹⁷

Asucaí Lorosae (Nain Feto, Dili)

Warga Asucaí Lorosae mengingat hari-hari setelah UDT melancarkan Aksi Bersenjata:

Pada 11 Agustus, kami terjaga dan mendapati bahwa UDT telah melancarkan kudetanya. [Pasukan keamanan] berkumpul di rumah seorang pemimpin Fretilin di samping Cina Rate [Kuburan Cina]...

Pada 16 Agustus, Lemos Pires dan kepala staf Portugis, Marcelino Barreto, berusaha menemui [pemimpin-pemimpin Fretilin] untuk menyelesaikan konflik ini... [Para pemimpin Fretilin] telah menyuruh tropas di Aileu untuk memberontak dan melucuti senjata [tentara Portugis], dan UDT bermaksud untuk merebut kekuasaan.

Tropas di Dili di Markas Besar (Quartel Geral) Taibessi dan PM dekat Palapaço [dikerahkan] untuk melancarkan kudeta balasan pada tengah malam 18 Agustus. Pada 20 Agustus, Rogério Lobato diberi kewenangan oleh Lemos Pires untuk memegang komando atas pasukan Timor Leste dan menyerahkan persenjataan yang ada di gudang senjata kepadanya. Warga sipil menerima senjata dari Quartel Geral pada 22-24 Agustus untuk memperkuat tropas.

Para pengikut UDT melarikan diri ke Timor Barat, dan Fretilin mulai menahan para pengikut UDT dan Apodeti di Quartel Geral di Taibessi dan di Comarca Balide, Dili. Anggota-anggota Komite Sentral Fretilin (CCF) datang dan memukuli mereka tanpa pandang bulu. Pada September, Comissão de Policia de Siguranca Publica Inquerito Politica Militar (CIPM – Komisi Polisi Militer untuk Kepolisian dan Kemanan) dibentuk untuk “mengatur situasi”. Banyak orang di Comarca meninggal akibat penyakit, dan banyak juga yang terluka.¹⁸

Bemori (Nain Feto, Dili)

Warga Bemori menggambarkan kekacauan yang ditimbulkan oleh konflik itu terhadap kehidupan sehari-hari warga:

Pada 1975 situasi menjadi panas. Orang-orang mulai saling melempari batu, berkelahi satu sama lain dengan menggunakan tombak dan parang. Beberapa orang menggali lubang-lubang bawahanah sebagai tempat untuk bersembunyi. Antara Oktober dan Desember, semua orang sudah meninggalkan rumahnya dan bersembunyi di daerah-daerah sekitar. Beberapa orang lari untuk bersembunyi di gua-gua selama tiga bulan. Situasi pangan sulit. Banyak orang lapar, tapi tak ada seorang pun yang mati kelaparan.¹⁹

Pembunuhan di luar hukum oleh UDT di Liquiça

37. Komisi telah menerima bukti menguatkan bahwa pada 11 Agustus 1975, pasukan UDT, yang dipimpin oleh M1, melakukan serangkaian serangan di Desa Darulete (Liquiça, Liquiça), di sebuah daerah dekat *Fazenda Kaitugloa* milik keluarga Carrascalão. Menurut kesaksian, serangan-serangan itu, yang dimaksudkan untuk menangkap pemimpin Fretilin setempat bernama Afonso dos Santos, mengakibatkan tewasnya dua penduduk sipil, yang dikenal bernama Mau Manu dan Lakucai.²⁰

38. Seorang saksi mata atas pembunuhan itu, anak laki-laki Mau Manu, menceritakan kepada Komisi bahwa delapan anggota UDT yang bersenjata, termasuk M1, M2, M3, M4, dan M5, menembak dan membunuh Mau Manu, penduduk desa setempat yang ketika itu sedang lari dari rumahnya menuju bukit. Guilherme Martins menceritakan kepada Komisi tentang kematian ayahnya:

Saat itu 11 Agustus, sekitar jam 8 pagi, Senhor M1 dan anggotanya datang dengan empat buah senjata; FBP, dua Mauser dan satu buah pistol...Sampai di rumah kami, ayah saya, Mau Manu, keluar dari rumah dan naik ke arah bukit. Senhor M1 dan anggotanya kemudian menembak dari arah jalan raya. Peluru menembus tengkuk ayah saya, hingga menembus keluar dari dahi. Ayah saya langsung roboh ke tanah, tapi belum tewas. Kemudian salah seorang anggota senhor M1, yaitu M4, mendapati ayah saya dan membacok bahu kirinya dengan parang tiga kali, sekali di leher bagian kiri, pinggang, dan tiga kali bacokan di bagian belakang lutut. Ayah saya langsung tewas.²¹

39. Segera setelah pembunuhan Mau Manu, kelompok bersenjata yang sama itu membunuh seorang penduduk desa lainnya yang bernama Lakucai. Lakucai adalah lelaki tua yang sebelah matanya buta. Ia bekerja sebagai juru masak dan tukang cuci pada seorang pegawai di pengadilan setempat. Menurut kesaksian yang disampaikan oleh istrinya, Adelina Freitas, Lakucai dibunuh setelah pembunuhan Mau Manu. Ia dipenggal, dan kepalanya ditancapkan di sebuah tonggak di depan rumah Afonso dos Santos di Darulete. Para lelaki bersenjata itu mengambil mobil Afonso ketika mereka tidak menemukannya di rumah itu. Adelina Freitas menceritakan kepada Komisi bagaimana dia mengambil kepala suaminya dari halaman depan rumah

Afonso. Ia membungkus kepala itu dengan selebar tais, menyatukan kembali kepala dengan badannya yang tergeletak 500 meter dari situ, dan menguburkan suaminya di kuburan di samping rumah mereka di Darulete.²²

40. Dalam sebuah peristiwa lainnya, UDT menahan para pendukung Fretilin, yang berakibat pada sekurang-kurangnya satu pembunuhan. Pada 11 Agustus, pasukan UDT memasuki daerah yang disebut Pukemenan di Desa Leotela (Liquiça). Mereka menahan tujuh pendukung Fretilin. Menurut Marçal da Conceição, salah satu dari ketujuh lelaki itu, yakni Paul Madeira, ditikam sampai mati. Yang lainnya dibawa ke Desa Dato (Liquiça, Liquiça).²³

Pembunuhan-pembunuhan oleh UDT di Manufahi, Ermera, dan Aileu

41. Di beberapa distrik, Gerakan 11 Agustus UDT langsung mengakibatkan berbagai bentrokan dan pembunuhan. Beberapa pembunuhan itu jelas menewaskan para pendukung partai yang bersenjata. Sebagian lainnya merupakan pembunuhan atas penduduk sipil yang tidak bersenjata.*

42. Komisi mendengar kesaksian tentang suatu pembunuhan di Distrik Manufahi. Para pemimpin dan pendukung UDT aktif mengincar anggota Fretilin. Mereka menemukan Carlito da Silva, seorang pendukung Fretilin, dan membunuhnya di tempat yang disebut Fore-Udo di Letefoho (Same, Manufahi) pada 11 Agustus 1975.²⁴

43. Di Ermera, pada hari yang sama, pemimpin UDT setempat, M6, dilaporkan telah menangkap dan membunuh Maumanu, seorang pendukung Fretilin, di Talitu di perbatasan Railaco Kraik.²⁵

44. Di Aileu, pada 11 Agustus, terjadi bentrokan yang mengakibatkan terbunuhnya tiga orang: Mali Bere, Mariano, dan Antonio. Selama kekacauan itu, para pembunuhnya tidak diketahui. Namun setelah itu, penduduk sipil di Henrian, Madabeno (Laulara, Aileu) mencurigai bahwa tiga anggota UDT bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Mereka menangkap seorang lelaki bernama Martinho, yang pada waktu itu merupakan *liurai* setempat, dan dua orang lainnya, Domingos dan Basco.²⁶

Pembunuhan di luar hukum setelah aksi bersenjata UDT, 12 – 17 Agustus

45. Dalam minggu antara aksi bersenjata UDT dan dilancarkannya reaksi bersenjata balasan Fretilin pada 18 Agustus, pembunuhan di luar hukum terus berlangsung di beberapa distrik bagian tengah dan barat. Sebagian besar pembunuhan ini dilakukan oleh anggota UDT. Dalam beberapa kasus pemimpin-pemimpin Fretilin setempat menjadi sasaran.

* Dalam periode ini, perbedaan antara penduduk sipil dan pendukung partai yang bersenjata sering sulit dipastikan.

Pembunuhan oleh pendukung UDT di Liquiça

46. Dimulai dengan pembunuhan-pembunuhan pada 11 Agustus yang telah dipaparkan di atas, selama tiga hari berikutnya gerombolan-gerombolan pasukan bersenjata UDT membunuh sekurangnya delapan penduduk sipil. Dua dari delapan orang ini dipenggal dan kepala mereka dipajang dalam kejadian terpisah, di depan rumah para pemimpin Fretilin setempat. Hanya satu dari kedelapan korban itu yang memang benar-benar pemimpin Fretilin. Dari keterangan para saksi, korban-korban lainnya tampaknya merupakan orang-orang tak bersalah yang kebetulan berada pada tempat dan waktu yang salah.

47. Pada 13 Agustus 1975, para pendukung UDT membunuh dan memenggal seorang pemimpin Fretilin setempat di Desa Leotela (Liquiça, Liquiça). Menurut kesaksian Brigida Martins, putri korban, empat anggota UDT bersenjata datang untuk mencari João Martins, seorang pemimpin Fretilin setempat, di rumahnya di Banitur. Karena tidak mendapati João Martins di rumah, para lelaki bersenjata itu pun membakar rumahnya. Dia kemudian ditangkap oleh seorang pendukung UDT lainnya di sebuah tempat di desa itu yang disebut Pukemenaro. Di hadapan saudara laki-laki, istri, dan anaknya, dia diikat dan dipaksa berjalan. Salah seorang yang menangkapnya, M10, mengambil tombaknya dan menikam João Martins dari belakang. Akibatnya, João Martins tumbang karena kehilangan darah di sebuah tempat yang disebut Rai Robu. Di situ M10 memenggal João Martins, sambil meneriakkan “Hidup UDT, saya telah memenggal kepala Fretilin.” Kemudian dia membawa kepala itu ke *Fazenda* Kaituglao (Darulete, Liquiça, Liquiça). Menurut beberapa kesaksian, seorang perempuan tua anggota UDT, yang dikenal bernama M11, berperan dalam menghasut pembunuhan ini dengan mendorong atau menyuruh pelaku untuk membunuh.²⁷

Meningkatnya ketegangan di Maubisse, Ainaro

Banyak kasus pembunuhan di luar hukum merupakan akibat dari perselisihan antara komunitas-komunitas yang bertetangga. Dalam beberapa kasus, kekerasan ini memiliki motif politik. Namun dalam kasus-kasus lain, perselisihan lokal di balik kekerasan-kekerasan ini sama besar andilnya dengan perpecahan politik UDT—Fretilin .

Dalam diskusi-diskusi terpisah dengan Komisi, warga Desa Manelobas, Manetu, dan Edi mengingat suatu bentrokan di Manelobas dan Manetu selama Agustus antara pasukan UDT dari Ermera dan pasukan Fretilin dari Turisca. Komunitas di Manelobas menceritakan kepada Komisi bahwa setelah bentrokan pertama itu, pasukan Fretilin menembak dan membunuh dua anggota pasukan UDT dari Ermera di Ernaro, Manelobas (Maubisse, Ainaro). Pasukan UDT kemudian membakar rumah-rumah dan membantai

hewan ternak di Manelobas. Fretilin menangkap dua pendukung UDT dan membawa mereka ke Turiscaí, di mana mereka dibunuh. Seorang pendukung UDT lainnya dibunuh di pusat desa di Ernaro. Ia dipenggal dan kepalanya dibawa ke Turiscaí. Para pendukung Fretilin bergerak ke Turiscaí.²⁸

Di Manetu, kebanyakan orang bergabung dengan ASDT dan kemudian dengan Fretilin. Namun, sang *liurai* mendirikan cabang UDT. Warga ingat bahwa pasukan UDT dari Ermera datang dan membakar rumah-rumah, membunuh, dan mencuri hewan ternak. Dalam aksi tembak-menembak di perbatasan sungai dengan Manelobas, dua serdadu UDT terbunuh. Para pendukung Fretilin lari ke Turiscaí. Di muara sungai di *aldeia* Boro Ulu, Manetu (Maubisse, Ainaro), yang berbatasan dengan Turiscaí, Fretilin membunuh seorang penduduk desa yang pernah bekerja untuk *liurai* Manetu.²⁹

Warga Edi mengingat peristiwa yang sama. Namun, mereka memaparkan serangan empat hari yang dilakukan oleh pasukan UDT dari Ermera, Atsabe, dan Maubisse, saat banyak rumah dibakar dan hewan ternak dibunuh. Mereka juga mengingat pembunuhan dua pendukung Fretilin, salah satunya dipenggal. Mereka juga menceritakan kepada Komisi tentang menghilangnya *liurai* setempat yang sebelumnya lari ke Aileu, tempat ia ditahan oleh Fretilin. Sejak saat itu ia tidak pernah terlihat lagi.³⁰

Di Desa Maulau (Maubisse, Ainaro) pada 14 Agustus, para pendukung Fretilin dari Turiscaí membakar delapan rumah di Laka Malikau, Maulau (Maubisse, Ainaro). Serangan ini terjadi seminggu setelah serangan oleh pasukan Fretilin pada 7 Agustus atas desa tersebut (lihat paragraf 34 di atas), dan sebagai reaksi balasan terhadap aksi bersenjata UDT 11 Agustus. Sekelompok pasukan UDT dari Ermera yang terdiri atas 30 orang diperintahkan untuk datang mendukung serangan pada 14 Agustus di Maulau ini. Akhirnya seorang pemimpin Fretilin, Januario Soares, serta komandan kompi dan anggotanya tiba dan berkata kepada orang-orang: “Tidak ada lagi partai-partai, semua orang adalah bagian dari partai rakyat Maubere (Fretilin), dan tidak akan ada pembunuhan lagi.” Sampai saat itu, 37 orang, yang kebanyakan adalah pendukung UDT, telah dibunuh.³¹

48. Dalam sebuah kejadian terpisah pada 13 Agustus 1975, para pendukung UDT di desa tetangga Asumano (Liquiça, Liquiça) berkumpul di rumah M12, pemimpin UDT setempat. Di sana mereka menaikkan bendera UDT.³² Menurut kesaksian yang diterima Komisi, kelompok orang ini, termasuk di dalamnya M13, M14, M15, M16, M17, M18, dan M19, berjalan kaki ke rumah kepala desa Asumano, dengan membawa seorang lelaki tua yang diyakini memiliki kekuatan sakti (*lulik*).

Kemudian mereka melakukan upacara ritual di bawah tiang bendera, dan menjadi semakin teragitasi. Pada saat ini, seorang lelaki bernama Mau Besi mendekati kerumunan itu. Tiba-tiba kelompok itu menyerangnya. Ia dikejar dengan tombak dan parang, dan akhirnya tertangkap dan dipenggal. Kepalanya ditancapkan di sebuah tonggak di bawah tiang bendera di depan rumah kepala desa. Upacara ritual pun dilanjutkan. Setelah selesai upacara, kepala Mau Besi dibawa ke rumah M12.³³

49. Komisi juga mendengar bahwa pada hari yang sama, enam orang lainnya dibunuh di *aldeia* Siskualema (Liquiça, Liquiça) dan Hatumatilu, Asumano (Liquiça, Liquiça) dan bahwa penangkapan anggota-anggota Fretilin dan orang-orang lainnya terjadi setelah pembunuhan tersebut.³⁴

Pembunuhan terpisah oleh pendukung Fretilin dan pendukung UDT di Aileu dan Manufahi

50. Komisi menerima kesaksian bahwa pada 13 Agustus, dua anggota UDT, Manuel de Jesus dan Alberto Sousa, ditangkap oleh sekelompok pendukung Fretilin (M20, M21, M22, dan lainnya). Kedua korban itu dibawa ke Remexio di Aileu. Setelah bertemu dengan sekelompok anggota Fretilin lainnya, kedua korban itu dibunuh di sungai antara Acumau (Remexio, Aileu) dan Darlau.³⁵

51. Francisca Bere-Sera menceritakan kepada Komisi tentang pembunuhan ayahnya, Maubere, di *aldeia* Betulalan, Aitutu (Hato Builico, Ainaro), pada 14 Agustus 1975. Pasukan UDT membunuhnya, kemudian membakar rumahnya. Setelah itu, Francisca Bere-Sera menguburkan sisa-sisa jasad ayahnya.³⁶

Pembunuhan oleh pendukung UDT di Ermera

52. Pada 11 Agustus, para anggota UDT menangkap sekelompok anggota Fretilin, termasuk Anacleto Pires, Martinho do Santos, Antonio de Deus, Abel Pinto, dan José Bosco. Mereka diikat ke sebuah tiang bendera oleh UDT dan ditahan selama 40 hari berikutnya. Pada 14 Agustus, pemimpin UDT setempat, M6, membawa sekretaris Fretilin setempat yang bernama Vicente, ke Aifu, tempat dia kemudian dibunuh. Hal ini memancing terjadinya bentrokan antara anggota UDT dan anggota Fretilin di Dukurai (Letefoho, Ermera), yang menyebabkan kematian sekurangnya seorang penduduk sipil yang bernama Mau Bere Menco.³⁷

53. Satu pembunuhan lainnya terjadi di subdistrik Hatulia (Ermera) pada 15 Agustus. Pasukan UDT menangkap lima lelaki yang bernama Marcelino, Rasi Batu, Maumeta, Maubuti Maubere, dan seorang perwakilan Fretilin bernama Julião. Mereka diikat jadi satu dan dibawa ke sebuah lokasi yang disebut Guntur, Leimea Kraik (Hatolia, Ermera). Julião kemudian dibawa ke bantaran sungai dan ditembak mati dengan senapan.³⁸

Pembunuhan massal oleh UDT dan Fretilin di Turiscaí dan Laclubar

54. Serangkaian peristiwa telah berakhir dengan pembunuhan yang dilakukan baik oleh para pendukung UDT maupun para pendukung Fretilin di Desa Fatumakerek (Laclubar, Manatuto) dan di Subdistrik Turiscaí (Manufahi). Pada Agustus 1975, pasukan UDT dari Soibada, Laclubar dan Barique mengumpulkan 300 laki-laki di Fatumakerek untuk menyerang basis Fretilin di Turiscaí pada 19 Agustus. Fretilin punya persenjataan yang lebih baik dan bisa mematahkan serangan itu. Tapi, menurut Francisco Barbosa³⁹, serangan UDT itu menewaskan tiga orang pendukung Fretilin—Antonio Barbosa, Tito Manuel, dan seorang lelaki yang dikenal bernama Jacinto.

55. Menurut kesaksian, pasukan Fretilin berupaya mencegah agar kekerasan itu tidak terjadi. Dalam sebuah wawancara dengan Komisi, Francisco Xavier do Amaral menceritakan bagaimana ia mengirim 11 anggota Fretilin dari Subdistrik Turiscaí untuk menemui para pendukung UDT di desa tetangga Foholau (Turiscaí, Manufahi). Menurut Amaral, delegasi itu dikirim dengan misi untuk memastikan bahwa pertempuran tidak akan pecah antara para anggota kedua komunitas tersebut, yang memiliki ikatan keluarga yang dekat namun dengan afiliasi politik yang bertentangan.⁴⁰ Mateus Soares, salah seorang yang selamat dari pembunuhan massal yang terjadi setelah itu, memaparkan kepada Komisi:

Ketika konflik partai politik pecah pada Agustus 1975, saya sedang berada di Turiscaí. Pada masa itu UDT mengatur serangan di berbagai daerah termasuk Laclubar, Soibada, dan Turiscaí. Saya tidak tahu mengapa mereka melakukan serangan ini dan berapa jumlah orang yang mati. Setelah selesai melakukan serangan, mereka kembali ke Foholau di Turiscaí, di mana UDT mendirikan markas mereka.

Francisco Xavier do Amaral memulai misi yang melibatkan 11 pejuang Fretilin, dipimpin oleh Geraldo Barbosa. Tujuan misi ini adalah pergi ke Foholau untuk berbicara dengan UDT mengenai kemungkinan hubungan kerjasama antara UDT dan Fretilin. Kami berjalan ke Foholau untuk memulai pembicaraan, tetapi begitu kami tiba, para militan UDT menyerang dan menangkap kami. Mereka tidak memberi kami kesempatan untuk menjelaskan maksud kedatangan kami. Tangan kami langsung diikat dan kami mulai disiksa. Kemudian kami dibawa ke Laoda di Fatumakerek, Laclubar, dan disiksa lagi. Kami tidak diberi makan maupun minum. Di daerah Laoda ada sebuah rumah tradisional. Di halaman rumah itu para militan UDT sedang mengasah senjata-senjata mereka dengan batu asah. Mereka dengan bangga memamerkan parang, tombak, pedang, dan panah mereka. Lalu seseorang di dalam rumah memulai upacara ritual tradisional. Dia keluar dari rumah dan mulai berlari, melompat, dan berteriak-teriak sesuai dengan ritualnya. Kami masih

terikat dan sangat ketakutan. Ketika upacara selesai mereka menarik kami naik ke sebuah gundukan tanah dekat rumah lalu dibawa ke pinggir jurang. Para militan menghunjam kawan-kawan saya dengan tombak dan mendorong mereka ke arah jurang. Saya diikat ke seorang teman dan ketika para militan melemparkan golok ke arah kami, golok itu meleset dan memotong tali yang mengikat kami. Saya melemparkan diri ke jurang meskipun tangan saya masih terikat di belakang. Mereka melempar batu dan tombak ke dalam jurang itu. Salah satunya mengenai...pemimpin kami, Gerardo Barbosa, yang masih hidup ketika jatuh ke jurang. Hanya tiga dari kawan-kawan saya yang selamat dari pembantaian ini; José Morena, Gaspar, dan satu orang lagi.⁴¹

56. Setelah kejadian ini, para pendukung Fretilin dari Turiscaí membalas, dan dilaporkan membunuh enam orang.⁴²

Pembunuhan di luar hukum antara 18 – 20 Agustus

57. Pada 18 Agustus, Fretilin/Falintil melancarkan reaksinya terhadap gerakan UDT 11 Agustus. Meski UDT terus melakukan pembunuhan di luar hukum, namun sejak saat ini Fretilinlah yang menjadi pelaku utama pembunuhan.

Pembunuhan massal oleh Fretilin di Aileu

58. Satu distrik di mana sejumlah pembunuhan di luar hukum terjadi selama hari-hari menyusul reaksi bersenjata Fretilin adalah Aileu, tempat Fretilin mendirikan markas besarnya setelah Gerakan 11 Agustus UDT. Domingos da Silva Soares menceritakan kepada Komisi bahwa pada 19 Agustus, seorang pemimpin Fretilin yang bernama M23 bersama sekelompok anggota Unetim Uniao Nacional de Estudantes de Timor, (Sayap pemuda Fretilin) menangkap Afonso Mesquita. Dia dibawa ke pusat penahanan di Unmenlau (Laulara, Aileu). Ayah Afonso Mesquita, Mau Loe, datang untuk mencari kabar tentang putranya, tetapi dia sendiri kemudian ditangkap dan ditahan. Afonso Mesquita berhasil meloloskan diri. Akibatnya, ayahnya dibunuh oleh seorang anggota Unetim. Mayatnya dilemparkan ke Sungai Berloi Fatisi (Turiscaí, Manufahi).⁴³

59. Joanico Pereira menceritakan kepada Komisi bahwa satu kelompok yang terdiri atas delapan orang ditahan di Fatisi (Laulara, Aileu) oleh Fretilin karena dicurigai sebagai mata-mata UDT. Pada 20 Agustus, kedelapan orang itu dibawa keluar, dan lima di antaranya dibunuh di Sungai Berloi, Desa Fatisi. Tiga orang lainnya dibunuh dekat Desa Fatisi. Kedelapan lelaki yang dibunuh adalah Mannusa, Antonio, Leandro, Mausoko, Maukuta, Laubelam, Maimeta, dan Manuel.⁴⁴

Pembunuhan balas dendam oleh Fretilin di Liquiça

60. Dalam sebuah diskusi dengan Komisi, warga Asumano (Liquiça, Liquiça) mengisahkan bahwa anggota-anggota Fretilin mulai melakukan balas dendam terhadap pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan UDT minggu sebelumnya. (Lihat keterangan di subbagian yang berjudul “Pembunuhan di luar hukum setelah aksi bersenjata UDT, 12-17 Agustus” paragraf 45 - 46) Pada 20 Agustus, pasukan Fretilin mengibarkan bendera mereka di *aldeia* Hatumatilu, Asumano (Liquiça, Liquiça). Fretilin menangkap dan menahan 40 pengikut UDT kemudian membawa mereka ke Leorema (Bazartete, Liquiça). Kebanyakan dari mereka kemudian dilepaskan atas perintah Graciano da Silva, seorang pemimpin Fretilin yang pernah ditahan UDT. Namun, delapan orang tahanan dibunuh di sebuah tempat yang disebut Fatubesi di *aldeia* Hatumatilu, Asumano.⁴⁵

61. Pada 20 Agustus 1975, pasukan Fretilin/Falintil dari Aileu menculik tujuh anggota UDT yang sedang berada di Fazenda Kaitugloa, Liquiça, tempat terjadinya pembunuhan-pembunuhan sebelumnya oleh UDT.⁴⁶ Mereka dibawa ke Darulete, di mana mereka dieksekusi di sebuah tempat yang disebut Mampatia, Darulete (Liquiça, Liquiça). Termasuk di antara ketujuh korban adalah empat lelaki yang bernama Evaristo, Mau Loe, Maubuti, dan Maulaku.⁴⁶ Salah seorang saksi atas pembunuhan itu, Carlos Vicente de Sousa, terluka dalam serangan UDT di Darulete. Ia menyampaikan pandangannya tentang serangan itu kepada Komisi:

Kita harus bicara secara objektif. Bahwa perang yang terjadi adalah bagian dari sejarah kita. UDT memulainya, lalu Fretilin membalas pembunuhan ini selama ‘kudeta balasan’. Pada waktu itu hanya ada sedikit penghargaan atas kemanusiaan atau keadilan. Tujuh orang terbunuh di Darulete.⁴⁷

62. Adanya kejadian ini dibenarkan oleh komunitas di Darulete selama diskusi dengan Komisi.⁴⁸ Warga Darulete juga mengingat bahwa selain orang-orang yang dibunuh itu, 50 lainnya ditahan. Tetapi, seperti yang terjadi di Asumano, campurtangan pemimpin Fretilin setempat, Afonso dos Santos, menghasilkan pembebasan mereka.

Pembunuhan oleh pasukan UDT di Ermera

63. Dalam kesaksiannya kepada Komisi, Abel de Oliveira Pinto menceritakan tentang pembunuhan seorang lelaki bernama Mausoco Meugoco di Sandato (Letefoho, Ermera). Ia ditembak pasukan UDT yang dipimpin oleh M24. Kepala Mausoco dipenggal dan dibawa ke Kota Truscai Letefoho.⁴⁹

.....
^{*} *Fazenda* Kaitugloa adalah perkebunan kopi milik keluarga Carrascalão. Beberapa pembunuhan terjadi di wilayah sekitar perkebunan itu selama periode konflik internal. Lihat keterangan-keterangan di subbagian “Pembunuhan pada 11 Agustus, hari aksi bersenjata UDT paragraf 36 - 44” dan “Pembunuhan menyusul aksi bersenjata UDT, 12-17 Agustus” paragraf 45 -46.

Pembunuhan antara 21 Agustus dan 30 Agustus, periode besar konflik bersenjata internal

64. Selama konflik dengan UDT, Fretilin/Falintil mendapatkan dukungan dari sebagian besar anggota Timor dalam militer Portugis, dan konflik bersenjata berlangsung terutama di Dili. Keunggulan militernya berarti bahwa Fretilin/Falintil dengan cepat bisa meraih kemenangan. Pada awal September, pasukan UDT tengah bergerak mundur dan pertempuran antara kedua pihak hampir berakhir. Namun, pembunuhan penduduk sipil terus terjadi. Pembunuhan-pembunuhan ini dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi terutama oleh Fretilin. Kedua pihak diketahui telah melakukan pembunuhan massal selama periode ini.

Pembunuhan tahanan oleh UDT di Palapaço, Dili

65. Setelah UDT menguasai Dili pada 11 Agustus, para pendukung Fretilin ditahan di markas besar UDT di Palapaço, Dili. Komisi telah menerima bukti mengenai kematian tiga lelaki di pusat penahanan yang dikontrol UDT di Palapaço. Ketiga lelaki itu adalah José Siqueira, Domingos Conceição, dan José Espirito Santo.⁵⁰

66. Komisi telah menerima bukti yang menguatkan tentang pembunuhan salah seorang tahanan, José Siqueira, seorang anggota Komite Sentral Fretilin, pada 24 Agustus 1975. Menurut Mario Reis, yang menyaksikan pembunuhan itu, José Siqueira menjadi gelisah karena selama penahanan ia tidak bisa meminum obat yang ia butuhkan untuk kondisi medis khusus yang ia derita. Ia mulai berteriak. Hal ini mengundang perhatian para penjaga penjara yang berasal dari Ermera. Salah satu dari mereka kemudian melepaskan tembakan yang membunuh José Siqueira seketika. Mayatnya tetap berada di sel penjara itu sampai keesokan paginya.⁵¹

67. Keesokan harinya, 25 Agustus 1975, Marito Reis kembali menyaksikan pembunuhan yang rupanya tidak disengaja atas dua orang lelaki, yakni Domingos Conceição dan José Espirito Santo. Marito Reis menceritakan kepada Komisi bahwa pada sekitar pukul 5 sore itu, ia, kedua lelaki itu, dan seorang lelaki lainnya yang agak tua, meninggalkan tempat mereka disekap untuk pergi ke toilet dengan diawasi oleh seorang pengawal UDT bersenjata. Tiba-tiba, sebuah selongsong mortir dari pasukan Falintil jatuh di suatu tempat dekat Palapaço. Pengawal bersenjata itu kaget oleh bunyi keras mortir dan menarik picu senjatanya. Peluru melesat menembus tubuh José Espirito Santo dan mengenai Domingos Conceição. Kedua tahanan itu pun tewas.⁵²

Orang Portugis terbunuh selama Konflik Internal

Meski mayoritas warga negara Portugal mengungsi ke zona “netral” di Farol dan tidak ikut campur dalam konflik bersenjata, beberapa dari mereka terlibat. Yang paling menonjol adalah Letnan Kolonel Rui Magiolo Gouveia, kepala PSP (Policia Segurança Publica). Dia “ditangkap” oleh UDT pada 11 Agustus, dan tiga hari kemudian secara resmi menyatakan dukungannya bagi UDT.⁵³ Setelah Aksi Bersenjata Fretilin, Kolonel Magiolo Gouveia ditangkap dan ditahan oleh Fretilin, pertama-tama di Dili, kemudian di Aileu sampai dia dieksekusi oleh Fretilin pada Desember.⁵⁴ Walaupun Kolonel Magiolo Gouveia merupakan warga negara Portugal dengan pangkat tertinggi yang dibunuh, ada eksekusi-eksekusi lainnya. Salah satunya terhadap Lino “Cowboy”, yang dibunuh oleh Fretilin di Same pada Januari 1976.⁵⁴

Pembunuhan massal oleh Fretilin di Ermera

68. Dalam kesaksian kolektifnya kepada Komisi, komunitas Desa Lacro (Atsabe, Ermera) mengingat pembantaian yang dilakukan oleh Fretilin pada 22 Agustus. Mereka menceritakan kepada Komisi bahwa pasukan Fretilin dari Aileu dan Maubisse memasuki desa Paramin (Atsabe), dan membunuh 11 orang yang keliru dituduh sebagai anggota Apodeti.⁵⁵

69. Juga di Ermera, seorang anggota UDT bernama Antonio Exposito dibunuh di Tokoluli (Railaco, Ermera) pada 30 Agustus. Pemimpin Fretilin setempat, M25, menangkap tiga anggota UDT. Kemudian Antonio tiba dan dipukuli, lalu ditembak. Mayatnya dilemparkan ke dalam rumahnya dan dibakar.⁵⁶

Pembunuhan tahanan oleh UDT di Ermera

70. Komisi mendengar kesaksian tentang pembunuhan di luar hukum seorang tahanan di Ermera menjelang akhir Agustus oleh pasukan UDT. Pembunuhan ini terjadi pada 26 Agustus ketika seorang anggota Fretilin bernama Antonio Salsinha meloloskan diri dari orang-orang UDT yang menangkapnya di Desa Poetete (Ermera, Ermera). Ia berada dalam kondisi yang buruk setelah dipukuli oleh pasukan UDT. Dia pulang ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan medis. Namun ketika pasukan UDT sadar bahwa ia melarikan diri, mereka pergi untuk menangkap kembali Antonio dan pada 27 Agustus menembaknya mati.⁵⁷

* Lihat bagian pembunuhan oleh Fretilin, paragraf 177.

Pembantaian tahanan oleh UDT di Wedauberek (Mahaquidan, Alas, Manufahi)

71. Komisi mendengar kesaksian tentang pembunuhan 11 orang pendukung Fretilin di pantai yang disebut Meti-Oan, di Wedauberek pada 27 Agustus 1975. Menurut Ildio Maria de Jesus, putra salah satu korban, pasukan UDT menahan 11 pendukung Fretilin di Alas pada 11 Agustus. Para tahanan antara lain adalah anggota organisasi pemuda Fretilin, Unetim. Anggota UDT yang melakukan penangkapan antara lain M26, M27, M28, dan M29. Para tahanan Fretilin ini ditahan di Alas dari 11 sampai 16 Agustus dan pada 17 Agustus mereka dipindahkan ke Same. Setelah mendengar bahwa pasukan Falintil dari Aileu sudah dekat, para pendukung UDT membawa para tahanan ke selatan menuju pantai, lalu membunuh mereka. Ildio Maria de Jesus, yang melihat mayat-mayat itu segera setelah pembunuhan, menggambarkan pengalamannya kepada Komisi:

Kudeta UDT terjadi dan UDT mulai menangkap orang-orang. Ayah saya, José Maria, ada di antara mereka yang ditahan. Ia ditahan di Alas dari 11 hingga 16 Agustus lalu dibawa ke Same sampai 24 Agustus. Pada saat Falintil mulai maju ke Same dari Aileu, anggota-anggota UDT lari ke Natarbora, Manatuto, dan membawa sebelas tahanan Fretilin bersama mereka. Mereka pada mulanya ingin membunuh para tahanan itu di Natarbora tetapi orang-orang daerah itu menolak menurutinya.

Tanggal 27 Agustus pagi, sebuah truk lewat di depan rumah kami dengan sebelas tahanan di bak belakang. Para tahanan dikelilingi penjaga-penjaga bersenjata tetapi tampaknya mereka tidak diikat. Ayah saya melambatkan tangan sambil mengepalkan tangannya saat mereka lewat. Kami dengar mereka dibawa ke Besusu [Alas, Manufahi]...UDT telah memperingatkan kami bahwa jika kami tidak ingin dibunuh, kami harus lari ke hutan, sehingga saya, ibu saya, beserta adik-adik lari ke bukit terdekat. Ketika kami di sana, kami dengar tembakan dari arah pantai Meti-Oan, Wedauberek. Empat hari kemudian, 31 Agustus, Falintil dari Same menemukan mayat-mayat yang terkapar di Pantai Meti-Oan. Tahanan lain yang dibunuh bersama dengan ayah saya adalah Secretario Regional, Infremeiro [mantri kesehatan] Ponciano; Vice Sekretario, Sabino Soares Pereira yang adalah Pikuario [mantri hewan]; Segundo Vice, Bernardino Hornay; Sub-Delegado, António Guterres; Domingos Lobato, ketua organisasi pelajar Unetim; Chiquito Kaduak, Francisco, Domingos Ribeiro, dan Alexandre da Costa, semuanya anggota Unetim; dan Tonito Ribeiro, anggota Unetim yang masih tujuh belas tahun. Tonito dan Domingos adalah anak-anak mantri kesehatan Ponciano. Hari itu juga kami pergi ke lokasi pembantaian di pantai Meti-Oan dan menemukan sepuluh mayat, di antaranya mayat ayah saya. Ayah saya ditembak di perut. Tangannya tertutup ususnya sendiri yang keluar dari lubang di perutnya. Tangan Domingos Ribeiro terlepas dari tubuhnya.⁵⁸

Pembunuhan pemimpin Apodeti oleh Fretilin di Same (Manufahi)

72. Pasukan Fretilin/Falintil memasuki Same pada 27 Agustus. Pada saat itu, sebagian besar pasukan UDT telah melarikan diri ke timur menuju Distrik Baucau dan Viqueque.⁵⁹ Monis da Maia, yang ketika itu menjabat sebagai Sekretaris Kedua Apodeti di Distrik Manufahi, menceritakan kepada Komisi tentang penahanan dan pembunuhan Celestino da Silva, Sekretaris Regional Apodeti:

Pada 27 Agustus, pasukan Fretilin memasuki Same. UDT telah melarikan diri ke bagian timur. Kami tetap tinggal di Same dan pergi untuk menyaksikan kedatangan pasukan itu. Begitu serdadu-serdadu Fretilin melihat saya mereka menangkap saya dan memukuli saya sampai saya pingsan. Saya dibawa ke sebuah sekolah dengan beberapa orang lainnya, termasuk Celestino da Silva. M30, seorang pemimpin Fretilin, datang ke sekolah itu. Ia menyuruh Celestino membersihkan kotoran-kotoran di kamar kecil. Ketika sedang membersihkan kamar kecil itu, ia ditembak mati dengan sebuah mauser. Selebihnya dari kami ditahan di sekolah itu selama dua hari.⁶⁰

73. Monis da Maia juga menceritakan kepada Komisi tentang suatu kejadian saat ia kira para tahanan, termasuk dirinya, akan dieksekusi. Namun secara tak terduga, komandan Fretilin/Falintil, Mauhunu, berubah pikiran dan eksekusi pun dibatalkan:

Pada upacara penaikan bendera, kami, 11 orang, dibawa keluar dari tempat tahanan untuk dihabisi. Pada saat terakhir Mauhunu berubah pikiran, dan berkata, “Kalau mereka semua dibunuh, siapa yang akan jadi rakyat kita setelah kemerdekaan, pohon dan batu-batu saja?” Jadi, kami dibawa kembali ke tempat tahanan.⁶¹

Pembunuhan di luar hukum oleh pendukung Fretilin di Aileu

74. Pada 22 Agustus 1975, Luis Casimiro, seorang pendukung UDT, ditembak di bagian pinggulnya oleh M31, seorang anggota Fretilin. Pada saat itu, dia sedang bersembunyi di bawah tempat tidur di rumah mertuanya di Nunurema (Maubisse, Ainaro). Menurut istrinya, Rosa Pina Menezes, ia diseret di jalanan menuju rumah sakit setempat. Luka-lukanya dirawat oleh seorang dokter. Tanpa mengindahkan nasihat dokter, milisi Fretilin membawa Luis Casimiro ke Aileu. Keluarga Luis Casimiro yakin bahwa ia kemudian dibunuh di Aissirimou (Aileu Vila) pada 26 Agustus 1975, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh tetangga mereka, seorang pendukung Fretilin, yang mengatakan bahwa dia menyaksikan pembunuhan itu. Mereka juga mencurigai bahwa seorang anggota keluarga mereka yang punya dendam pribadi terlibat dalam pembunuhan tersebut.⁶² Namun, menurut Lucas da Costa, yang bertanggung jawab menjaga tahanan Portugis di Aileu, Luis Casimiro meninggal dalam penahanan di Aissirimou akibat luka tembakan yang ia derita

di Maubisse.⁶³ Francisco Xavier do Amaral, seorang kerabat jauh Luis Casimiro, menceritakan tentang kasus ini dalam kesaksiannya kepada Komisi. Menurut kesaksiannya:

Saya tahu dia meninggal karena saya selalu ikut dengan dia karena dia iparnya kakak saya yang tertua. Dan saya menyuruh kakak saya ke Maubisse untuk menyelamatkan dia, namun, dia tidak ada di tempat, dia lari... Pada umumnya [orang dibunuh karena] masalah politik, [tetapi] ada oknum-oknum yang memanfaatkan politik ini untuk mengambil tindakan sendiri-sendiri... dan Luis ini termasuk salah satu kasus seperti ini.⁶⁴

75. Dalam kasus lain yang diceritakan kepada Komisi, pada 30 Agustus Fretilin membunuh dua lelaki, Francisco de Araújo dan Duarte de Araújo, di Ainaro. Pembunuhan ini dilakukan oleh pasukan Fretilin yang dikomandoi oleh M33. Mayat para korban dibuang ke sungai di Surale-Barele.⁶⁵

Pembunuhan tahanan dan pembunuhan lainnya pada September

76. Pola pembunuhan pada September terkait erat dengan mundurnya UDT melalui distrik-distrik bagian barat Timor-Leste menuju Timor Barat. Pada 24 September, pasukan UDT melintasi perbatasan di Batugade masuk ke wilayah Timor Barat. Sebagian besar pembunuhan yang dilaporkan selama periode ini terjadi di Ermera, termasuk sebuah pembunuhan massal pada 1 September.

Pembunuhan massal tahanan oleh UDT di Klaek Reman (Ermera, Ermera)

77. Dengan dikuasainya Dili dan Aileu oleh pasukan Fretilin yang bergerak maju, pasukan UDT di Ermera mulai mengambil langkah yang semakin nekat. Di awal September, UDT telah dikalahkan di Dili. Meski UDT masih kuat di Ermera, pasukan Fretilin/Falintil semakin mendesak ke barat. Komisi mendengar bahwa pada 1 September 1975, sekurangnya 30 tahanan dieksekusi oleh pasukan UDT yang bergerak mundur di Ermera, empat orang di Klaek Reman (Ermera, Ermera), dan 26 orang di Aifu (Ermera, Ermera). Manuel Duarte selamat dari pembunuhan di Klaek Reman. Dia menceritakan kepada Komisi tentang kejadian ini:

Pada pagi hari tanggal 12 Agustus, saya ditangkap dan bersama empat orang lainnya dibawa ke Aifu. Di Aifu sudah ada banyak tawanan. Mereka mengikat kami dan memaksa kami berbaring di tanah seperti babi. Kami ditahan di sana lebih dari dua minggu. Pada 20 Agustus, menanggapi kudeta balasan di Dili, UDT lari ke Ermera. M6 memindahkan kami dari penjara di Aifu ke sebuah penjara di Ermera. Kami disekap di sana selama lima hari. Kami

ditumpuk-tumpuk berjejalan, tujuh puluh orang dalam satu sel. Tempat buang airnya hanya sebuah tong di tengah sel itu.

Pada 1 September, seorang komandan UDT memerintahkan angkatan bersenjata membawa Lorenço dos Santos, Armando Barros, Miguel Salsinha, Vicente, Armando, dan saya sendiri ke Aifu untuk dibunuh. Sebelum kami tiba di Aifu kami bertemu dengan anggota-anggota angkatan bersenjata dan komandan mereka yang datang dari jurusan Aifu, dan kami diperintahkan untuk pergi ke Klaek Reman, Ermera.

Di Klaek Reman mereka mengambil jam tangan dan uang kami, dan kami mengira kami akan dibunuh. Di sana kami berjumpa dengan kelompok tawanan yang kedua yang juga sedang menuju Aifu. Kami tidak berbicara satu sama lain. Kami hanya berdoa.

Satu kelompok terdiri atas 70 tawanan dibawa ke Aifu. Dalam kelompok ini ada dua anak-anak yang merupakan kerabat saya. Kelompok ini ditembak dengan senapan. Sebagian mati dan sebagian lagi selamat.

Kami berenam dibawa ke Klaek Reman. Lorenço meminta waktu untuk berdoa sebelum kami dibunuh. Kemudian mereka menikam kami dengan tombak. Kami terguling-guling dari puncak bukit itu ke perkebunan kopi dekat sungai. Serdadu-serdadu itu mengikuti kami dan memukul tulang geraham saya sampai patah. Kemudian mereka menjejerkan tubuh kami, menutupi tubuh kami dengan terpal, batang-batang pohon, dan kepingan-kepingan kayu, dan meninggalkan kami untuk mati sendiri di sana. Tangan saya diikat dengan kawat tetapi saya berhasil menyingkirkan batang-batang pohon dan kayu itu dan berdiri. Saya minum air yang menyebabkan saya muntah dan kemudian saya bersembunyi di sebuah gua kecil yang terjadi dari air terjun yang sudah kering... Pada waktu baru gelap saya menemukan rumput-rumput tinggi di dekat situ dan saya roboh, kehabisan tenaga samasekali.⁶⁶

78. Manuel Duarte berhasil merangkak ke rumah seorang temannya. Seorang perawat setempat memberinya perawatan medis. Keesokan harinya, 2 September, pasukan Fretilin/Falintil tiba dan dia dibawa ke Dili di mana dia mendapatkan perawatan medis dari Palang Merah. Menurut Manuel Duarte, dua dari enam orang dalam kelompok yang dieksekusi di Klaek Reman itu tidak mati, yakni dia sendiri dan Lorenço dos Santos, Sekretaris Regional Fretilin untuk Ermera.⁶⁷

Pembunuhan massal tahanan oleh UDT di Aifu (Ermera)

79. Florentino de Jesus Martins berada dalam kelompok tahanan yang dibawa oleh UDT ke Aifu untuk dieksekusi. Dalam kesaksiannya kepada Komisi, dia membenarkan terjadinya pertemuan tidak sengaja dengan enam tahanan yang dibawa ke Klaek Reman untuk dibunuh. Dia menceritakan tentang eksekusi sekurangnya 26 tahanan di Aifu pada hari yang sama, 1 September 1975:

Yang memerintahkan pada saat itu untuk membunuh tawanan adalah senhor M34. Tapi Senhor M34 mendapat mandat untuk membunuh tawanan dari M6 dan Senhor M35. Sampai di kediaman M35 di Aifu, mereka mengatakan kepada kami agar istirahat dulu. Kemudian kami dikeluarkan dalam kelompok kecil, sekitar empat orang, untuk membersihkan rumput di depan rumah. Kami duduk saja...

[Tiba-tiba] teman saya, Virgilio Exposto, dan seorang lagi dibawa ke sudut gudang lalu ditembak. Senjata meletus, kami mulai menangis. Kami berpikir: "Mungkin ini saatnya kami akan mati." Lalu kemudian membawa keluar lagi empat orang untuk dibunuh dan senjata meletus. Mereka datang membawa lagi empat orang. Mereka yang dibawa pergi untuk dibunuh, tangannya terikat semua dan ditembak dengan senjata Mauser.

Setelah membunuh beberapa orang itu, tinggal kami 30 orang lebih. Kemudian M34 menyuruh berhenti membunuh sebentar. Kami masih duduk di teras rumah. Mungkin karena M34 menerima kartu yang dikirim oleh Pedro Lemos [Falintil, Ermera] yang menyatakan, "Senhor M34, harus segera membebaskan semua tahanan yang berjumlah 70-an itu. Malam ini, Aifu sudah dikepung, pasukan kami mulai turun dari Hatolia dan Loerema."⁶⁸ Saya dan para tahanan lainnya yang tersisa akhirnya dilepaskan keesokan paginya. Tetapi beberapa orang telah meloloskan diri pada malam itu. Menurut kesaksian para saksi, 26 orang dieksekusi di Aifu. Ditambah dengan empat orang yang dibunuh di Klaek Reman, ini berarti bahwa sekurangnya 30 tahanan dari penjara UDT di Ermera dibunuh pada 1 September 1975.⁶⁹

Pembunuhan seorang tahanan UDT dan penghilangan pemimpin Apodeti oleh pasukan Fretilin/Falintil di Railaco (Ermera)

80. Komisi menerima bukti yang menunjukkan bahwa dengan semakin menguatnya Fretilin di Ermera pada awal September, Fretilin juga mulai melakukan pembunuhan. Pada September 1975, pasukan Fretilin memasuki Subdistrik Railaco (Ermera). Sekitar 50 orang pendukung UDT, termasuk seorang lelaki bernama Mateus Soares, berlingung di rumah Daniel Carvalho, Sekretaris Regional Apodeti di Ermera. Eufrazia de Jesus Soares, istri Daniel Carvalho, mengingat bagaimana suaminya menyuruhnya memasang kain putih di depan rumah untuk menunjukkan netralitas mereka dalam konflik itu. Daniel Carvalho menulis sepucuk surat kepada komandan Fretilin, memohon agar pasukan Fretilin tidak menggunakan kekerasan ketika memasuki Railaco. Ketika Fretilin masuk ke Railaco, Daniel Carvalho menyerahkan 50 orang pendukung UDT kepada pasukan Fretilin. Namun, tanpa peringatan apa pun, Mateus Soares diambil dari kelompok itu dan dieksekusi. Eufrazia de Jesus Soares menceritakan kepada Komisi tentang apa yang dikatakan suaminya kepadanya mengenai kejadian itu:

Suami saya mengatakan, "Saya tidak tahu akan jadi seperti ini. Saya pikir, menyerahkan mereka akan selamat. Tetapi seorang akhirnya dibunuh. Saya menyesal, seharusnya saya tidak menyerahkan mereka, biarkan mereka pergi...perasaanku tidak tenang, karena mereka menembaknya."⁷⁰

81. Menurut Eufrazia de Jesus Soares, beberapa hari kemudian, Daniel Carvalho ditangkap oleh pasukan Fretilin dan dibawa ke Aileu. Kemudian, dia dipindahkan bersama para tahanan lainnya ke Same di Manufahi. Keluarganya tidak pernah melihat dia lagi.

Pembunuhan tahanan oleh Fretilin di Aileu

82. Komisi diberitahu tentang serangkaian pembunuhan yang dilakukan pada awal September. Pada 28 Agustus, sekelompok anggota Fretilin/Falintil menangkap dan menahan sembilan anggota UDT di Aileu. Pada 3 September, kelompok Fretilin/Falintil kembali menangkap delapan anggota UDT lagi. Dua di antaranya dibunuh, satu orang bernama Mayor Lorenzo, dan yang seorang lagi anggota Apodeti. Korban ketiga, Simplicio, dibunuh di Soibada (Manatuto) dan dipenggal. Seorang lelaki lain, Abilio Amaral, juga dibunuh oleh Fretilin di Daisoli, Fatubosa (Aileu Kota, Aileu).⁷¹

Eksekusi di luar hukum oleh pasukan Fretilin/Falintil di Manatuto

83. Komisi menerima kesaksian tentang pembunuhan sepuluh anggota UDT di Manatuto pada September 1975. Pada 4 September, pasukan Fretilin/Falintil menyerang Desa Hatukonan-Laku Mesak (Laclo, Manatuto), dan menangkap 12 anggota UDT. Sembilan orang di antaranya dibawa ke Makati dan dibunuh. Pada 7 September, seorang korban lainnya, Pascoal Bernardo, ditahan oleh Fretilin dan diikat di bawah tiang bendera. Ia ditembak dan kemudian dipenggal.⁷²

Pembunuhan massal tahanan UDT oleh Fretilin di Katrai Kraik dan Ermera (Ermera)

84. Komisi menerima bukti kuat tentang pembunuhan tujuh orang pendukung UDT pada 15 September oleh pasukan Fretilin di Desa Katrai-Kraik (Letefoho, Ermera). Pembunuhan-pembunuhan ini tampaknya merupakan kasus pembunuhan balas dendam Fretilin/Falintil atas eksekusi-eksekusi oleh UDT pada 1 September. Menurut seorang saksi mata pembunuhan itu, Adelino Maia, pasukan Fretilin/Falintil yang dipimpin oleh seorang lelaki bernama M36, dan dua anggota milisi Fretilin yang bernama M37 dan M38, menahan tujuh pendukung UDT di Desa Katrai-Kraik. Para anggota UDT itu adalah Teti Mau, Mau Saka, Lequimau, Caetano, Maurema, Saka Bere, dan Mau Bere. Mereka dibawa ke lokasi yang disebut Germano di Desa Katrai-Leten, tempat mereka kemudian dieksekusi.⁷³

85. Pembunuhan seorang komandan UDT yang tertangkap juga diceritakan kepada Komisi. Kapten Miguel Martins adalah komandan UDT dari Ermera yang ditangkap Fretilin di Cailaco (Ermera) ketika hendak melarikan diri ke Timor Barat, Indonesia, pada 15 September. Ia dibawa ke Bobonaro dan kemudian dibawa kembali ke Ermera. Pada 25 September dia dibawa ke depan sidang “pengadilan rakyat” oleh Fretilin. Pemimpin Fretilin, M39, bertanya kepada hadirin: “Kalau kalian menjawab ‘pergi ke Aileu!’, dia hidup. Kalau kalian menjawab ‘tinggal di Ermera’, dia mati.”⁷⁴ Sebagian besar orang di antara kerumunan itu adalah keluarga para korban kekerasan UDT, dan mereka menjawab ‘tinggal di Ermera’. Kemudian M39 memerintahkan dua anggota Fretilin untuk mengikat Kapten Miguel Martins. Kapten Miguel Martins meminta izin untuk berdoa, berterima kasih kepada masyarakat atas salib yang diberikan kepadanya, dan meminta anak tertuanya untuk menjaga adik laki-laki dan adik perempuannya. Kemudian dua anggota Fretilin membawanya ke Dadesan di Ermera, lalu menembaknya.⁷⁵

Pembunuhan lainnya

86. Komisi menerima laporan tentang pembunuhan-pembunuhan di luar hukum selama periode ini yang tampaknya tidak cocok dengan pola umum yang dipaparkan di atas. Salah satu contohnya adalah pembunuhan 12 anggota Apodeti di Bobometo (Oesilo, Oecussi), oleh pendukung Fretilin di September.⁷⁶ Contoh lainnya adalah penangkapan 11 anggota Fretilin di Ataúro oleh kepala desa, Antonio Maria Gomes, seorang pendukung UDT. Empat dari para lelaki ini dibunuh oleh UDT.⁷⁷ Pembunuhan-pembunuhan ini tampaknya merupakan insiden terpisah yang terjadi di distrik-distrik yang selebihnya justru mengalami hanya sedikit kekerasan selama periode itu. Kasus-kasus ini menunjukkan dampak konflik internal terhadap masyarakat Timor-Leste, dan fakta bahwa konflik itu memancing terjadinya berbagai pembunuhan di seluruh wilayah.

Tanggung jawab Politik atas konflik bersenjata internal

Pada acara Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974 – 1976, para pemimpin partai UDT maupun Fretilin membicarakan isu sensitif tentang tanggung jawab atas konflik internal serta banyaknya korban tewas dalam konflik tersebut. Berikut ini adalah beberapa cuplikan dari apa yang mereka katakan:

Domingos Oliveira, Sekretaris Umum UDT ketika itu:

Dan sejak gerakan ini [11 Agustus] krisis semakin meningkat, seperti yang telah dikatakan orang-orang lain. Orang-orang saling bunuh, banyak orang. Saya sedih karena banyak orang terbunuh. Bukan saja Fretilin membunuh UDT, tetapi UDT juga membunuh Fretilin. UDT

membunuh tiga orang di penjara di Palapaço...dan Fretilin bereaksi atas mereka yang mati di dalam penjara. Banyak tahanan UDT juga mati, begitu banyak yang mati. Beberapa dibunuh di Aileu, beberapa dibunuh di Maubisse, dan beberapa dibunuh di tempat-tempat lain. Kita perlu melakukan penyelidikan pelan-pelan supaya tahu di mana mereka mati.

João Carrascalão, anggota Komite Sentral UDT ketika itu:

Saya ingin mengawali dengan menyatakan kepada Anda semua bahwa saya melakukan kesalahan terhadap komunitas saya. Semua korban UDT yang dibunuh Fretilin, adalah kesalahan saya. Semua korban Fretilin yang dibunuh UDT, adalah kesalahan saya. Karena saya memprakarsai Gerakan 11 Agustus, dan saya menerima tanggung jawab sepenuhnya untuk menegakkan kebenaran. Jika Anda mencari siapa yang dipersalahkan, tak perlu jauh-jauh mencari. Saya bersalah. Saya akan menanggung beban ini. Ingat, saudara-saudara, jika Anda cari-cari siapa yang salah, sayalah orangnya.

Tidak ada perintah untuk menangkap anggota-anggota Fretilin dan membawa mereka ke penjara. Tiba-tiba kami terkejut melihat penjara penuh. Tidak ada perintah dari Komite Sentral (UDT). Tindakan ini spontan...dan banyak orang bertindak karena alasan pribadi mereka sendiri, [karena apa yang terjadi] dari tahun-tahun sebelumnya, dan mereka ambil kesempatan dan hanya sembarangan menangkap orang-orang...Setiap hari saya pergi ke penjara UDT dan membebaskan 50-60 orang.

Jadi, tak ada kontrol. Siapa yang salah? Saya yang salah. Saya terima ini. Anda tak perlu cari banyak orang untuk dipersalahkan. Begitu banyak orang terbunuh, mendekati 1.200...kita melupakan tanggung jawab terbesar kita..Saya melakukan kesalahan karena saya tidak memahami orang-orang Timor.n

Francisco Xavier do Amaral, Presiden Fretilin ketika itu:

Banyak kebingungan. Semua orang panas, naik darah, dan karenanya baku pukul, kekacauan terjadi. Ketika yang ini menang, ia akan balas dendam ke yang lainnya. Ketika yang itu menang, ia akan balas dendam ke yang ini. Inilah yang terjadi pada 1975. Ini masalah di negeri kita. Contohnya, beberapa orang yang bekerja di satu tempat dan dipecat. Mereka balas dendam kepada atasannya ketika punya kesempatan, mereka lampiaskan kebencian mereka. Mereka saling pukul hingga terbunuh..ini adalah bagian dari karakter orang Timor. Ketika darahmu mendidih, hal-hal ini terjadi. Kita bilang bahwa kemarin Anda pukul ayah saya, anak saya, adik laki-laki saya, tanpa alasan, lalu kebencian timbul. Ini selalu ada di sini..."

Mari Alkatiri, Komisaris Politik Fretilin ketika itu:

[Selama] agresi yang lebih awal terjadi pada Agustus dan September, begitu banyak yang terjadi dan banyak orang terbunuh. Kita saling bunuh...seperti yang saya katakan dalam kesaksian sebelumnya... selama perang antara UDT dan Fretilin banyak orang mati. Beberapa orang bilang jumlah yang mati hingga mencapai 3.000 orang. Saya tidak yakin 3.000 orang mati dalam perang ini, tetapi kita akan tahu lebih jelas di masa mendatang.

Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa selama pendudukan Indonesia (1975 – 1999)

Pembunuhan di luar hukum oleh militer Indonesia sebelum invasi pada Desember 1975

Distrik-distrik barat (Agustus – Desember 1975)

87. Penyusupan oleh militer Indonesia ke distrik-distrik barat di Timor-Leste sudah dimulai pada akhir Agustus 1975. Operasi-operasi ini dijalankan oleh tiga kelompok pasukan khusus, yang disebut Tim Susi, Tim Tuti, dan Tim Umi. Unit-unit ini bekerja sama dengan kelompok orang Timor-Leste yang dikenal dengan nama Partisan, yang dilatih, dipersenjatai, dan dipimpin oleh ABRI.⁷⁸

88. Operasi rahasia yang dijalankan oleh tim Pasukan Khusus dan Partisan tersebut terjadi antara Agustus dan Desember 1975. Ketiga tim memasuki Timor-Leste melalui perbatasan Timor Barat. Mereka beroperasi secara terpisah dan kemudian berkumpul kembali di Atabae (Bobonaro) pada Desember 1975. Komisi telah mendokumentasikan sedikitnya 20 pembunuhan terhadap warga sipil selama bulan-bulan tersebut di subdistrik Atabae, Cailaco, Maliana, Balibó, dan Bobonaro.⁷⁹

89. Claudio Vieira, seorang Partisan yang ikut ambil bagian dalam operasi rahasia itu sebagai anggota Tim Umi, menuturkan kepada Komisi tentang pembunuhan dua warga sipil dekat Gunung Taroman oleh seorang Partisan bernama M41 yang menyertai Tim Umi ketika mereka masuk ke Suai pada September 1975. Kedua warga sipil tak dikenal itu, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ditangkap lalu dibunuh dengan parang. Tubuh mereka dibiarkan begitu saja di pinggir jalan.⁸⁰

90. Pada 1975, para prajurit ABRI dan sebuah unit Partisan yang dipimpin oleh M42 membunuh sedikitnya dua warga sipil di Subdistrik Balibó dan Atabae. Di suatu tempat bernama Litete di Balibó, kelompok bersenjata itu menangkap seorang warga sipil bernama Bau-Mau. Menurut penuturan saksi, Bau-Mau menolak menyerahkan busur dan panah yang dibawanya. Ia kemudian ditangkap, rumahnya dibakar, dan ternaknya dicuri. Ia sendiri kemudian dibunuh dan mayatnya dibuang di suatu tempat bernama Aipasrah.⁸¹

91. Dari data yang dikumpulkan oleh Komisi, jumlah kematian terbesar semasa operasi militer rahasia pra-invasi terjadi di Distrik Ermera. Menurut Marciana Gracia, pasukan Indonesia menyusup ke Subdistrik Atsabe pada September 1975, melalui Cailaco (Bobonaro). Di kampung Coileki, di Desa Baboe Leten (Atsabe, Ermera) mereka menangkap dan membunuh empat tahanan UDT yang ditahan oleh Fretilin, yakni Mau Butar, Berleki, Beremau, dan Mausico. Mereka dipukuli dan dibunuh di Haulete, Desa Malabe (Atsabe, Ermera), atas perintah komandan Batalion 403 dan komandan Partisan, M43.⁸² Deponen ini juga memberi kesaksian tentang pembunuhan empat warga sipil lainnya, yakni Casimiro Soares Gomes, Letisiga, Berhali, dan Loe Mau dalam empat kejadian terpisah di Atsabe. Dua dari keempat orang itu sedang bekerja di ladang ketika mereka dibunuh.⁸³

92. Komisi telah mendengar bukti kuat tentang kematian warga sipil dalam jumlah besar pada 8 September 1975 di Aifu (Atsabe, Ermera). Menurut Florentino de Jesus, Tim Susi di bawah komando M44 memasuki Ermera pada waktu fajar. Di Hatolia, Ermera, pertempuran pecah antara mereka dan pasukan Falintil. Dua orang mati, satu di masing-masing pihak. Tim Susi, yang terdiri atas ABRI dan anggota Partisan, mundur ke Haekesak (Atambua, Timor Barat) kemudian kembali ke Ermera melalui Asulau dan Matarobu-Borro (Ermera). Florentino de Jesus menuturkan kepada Komisi bahwa puluhan warga sipil terbunuh ketika Tim Susi tiba di Aifu. Di antara korban adalah Helder Varela, anak mantan *administrador posto*. Florentino de Jesus lebih jauh menuturkan kepada Komisi bahwa seorang prajurit Falintil bernama Celestino Soares juga terbunuh dalam serangan tersebut.⁸⁴ Cerita itu diperkuat oleh Tomas Gonçalves, seorang mantan anggota Partisan, yang menuturkan kepada Komisi sedikitnya 70 warga sipil telah terbunuh dalam serangan itu.⁸⁵

Pembunuhan lima wartawan di Balibó

93. Pada pagi hari 16 Oktober 1975, suatu operasi rahasia militer Indonesia dengan nama Tim Susi di bawah komando Kapten M44 (dengan nama samaran Mayor Andreas) melancarkan serangan untuk merebut kota Balibó (Balibó, Bobonaro).⁸⁶ Tomás Gonçalves memperkirakan bahwa sekitar 700 prajurit terlibat dalam serangan tersebut, termasuk ratusan Partisan dan satu kekuatan dari Para-Komando yang mendukung Tim Susi. Pasukan Indonesia pertama-tama melancarkan serangan bom ke Balibó dari arah pantai utara dan dari arah Maliana, kemudian melancarkan

* Saksi ini juga menyatakan kepada Komisi tentang korban jiwa di antara para petempur. Talo Bere, seorang tentara Falintil, ditembak mati oleh kelompok ini di Pona Ahi (Balibó, Bobonaro).

serangan darat dari tiga arah.⁸⁷ Dalam serangan itu, lima orang wartawan dari dua stasiun televisi Australia terbunuh, yaitu Greg Shackleton (29) dan Tony Stewart (21), keduanya dari Australia, yang bersama Gary Cunningham (27) dari Selandia Baru bekerja untuk stasiun televisi *Channel Seven* di Melbourne. Brian Peters (26) dan Malcolm Rennie (29), keduanya dari Inggris, bekerja untuk stasiun televisi *Channel Nine* yang berpusat di Sydney. Para wartawan itu telah berada di Balibó sejak 13 Oktober, meliput berita tentang operasi rahasia Indonesia di Timor-Leste dan mengantisipasi terjadinya serangan Indonesia ke kota itu.

94. Kematian para wartawan di Balibó kemudian menarik perhatian besar dunia internasional. Pemerintah Australia menugaskan dua penyelidikan mengenai kematian tersebut pada 1995 dan 1998 yang dipimpin oleh Tom Sherman. Dua buku yang terbit kemudian yang menyelidiki tentang kematian kelima wartawan itu—*Cover-Up* (2001) oleh Jill Jolliffe dan *Deaths in Balibó, Lies in Canberra* (2000) oleh Desmond Ball dan Hamish McDonald—mengandung informasi penting yang baru tentang pembunuhan itu. Buku *Kopassus* (2003) tulisan Ken Conboy juga memberikan informasi penting mengenai operasi militer untuk merebut Balibó didasarkan pada wawancara dengan sumber-sumber militer Indonesia yang mengambil bagian dalam operasi tersebut. Pada pertengahan 2000, Polisi Sipil UNTAET (Civpol) membentuk Unit Kejahatan Bersejarah di dalam Unit Penyelidikan Nasional dan mulai menyelidiki kematian di Balibó. Sebagai bagian dari penyelidikan ini, pada 22 Maret 2001 Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB, Sergio Vieira de Mello menulis surat kepada Jaksa Agung Indonesia meminta untuk melakukan wawancara dengan enam tersangka yang diyakini berada di Indonesia. Jaksa Agung Indonesia menolak permintaan ini dengan alasan bahwa Parlemen Indonesia belum meratifikasi akta kesepahaman tentang kerjasama menyangkut saksi antara UNTAET dan Kejaksaan Agung Indonesia, sehingga penyelidikan Polisi Sipil terhenti.

95. Semua penyelidikan mengenai kematian tersebut terbatas oleh kenyataan bahwa jasad-jasad para wartawan yang dikubur di perkuburan Tanah Kusir di Jakarta itu tidak diselidiki secara ilmiah dan bahwa para saksimata kunci di Indonesia menolak memberikan kesaksian pada berbagai penyelidikan resmi. Semua bahan yang disajikan di sini berpusat pada kesaksian saksi yang diberikan kepada Komisi berkaitan dengan kematian para wartawan.

Guido dos Santos

96. Guido dos Santos, yang pada saat itu berusia 24 tahun dan bertugas sebagai tenaga kesehatan Falintil, telah lama menjadi saksi utama peristiwa di Balibó. Dia telah memberikan keterangan sebagai saksimata segera setelah kejadian tersebut.⁸⁸ Pada Agustus 2000, ia berpartisipasi dalam rekonstruksi kejadian di Balibó yang diselenggarakan oleh Jill Jolliffe. Guido dos Santos tidak diwawancarai oleh Tom Sherman ketika Tom Sherman berada di Timor-Leste pada saat pemerintah Australia memulai penyelidikannya.⁸⁹

97. Komisi mewawancarai Guido dos Santos pada Juli 2004 dan melaksanakan wawancara yang direkam dengan video dengannya di lapangan Balibó pada September 2004. Dalam rekaman wawancara video ini, ia menjelaskan bahwa para wartawan memberikan isyarat padanya ketika ia berdiri di dekat sebatang pohon beringin yang besar di jalan menuju Cova.⁹⁰ Dia mempertahankan lapangan tersebut terhadap serangan tentara yang datang dari arah Unit Portugis, tetapi dia menyadari bahwa tentara Indonesia telah berada di jalan ke Maliana di sisi seberangnya. Ia kemudian melihat seorang wartawan jatuh. Ia berpikir bahwa wartawan itu diterjang peluru, meskipun ia sekarang tidak yakin apakah si wartawan tiarap untuk menghindari tembakan.* Hampir pada saat yang sama ketika ia melihat wartawan itu jatuh, Guido dos Santos juga melihat dan mendengar wartawan-wartawan yang lain berteriak, “Australia, Australia” dengan tangan diangkat. Ia tidak lari ke arah para wartawan, melainkan ke belakang rumah toko Cina lain yang menghadap ke lapangan, di pinggiran lapangan sepak bola sekolah dan di balik pohon beringin besar itu, kemudian mendaki lereng sisi benteng. Ia terus mendengar wartawan-wartawan berteriak selama kira-kira dua menit sampai ia mencapai jalan tempat ia merasa aman. Seperti yang ia katakan dalam wawancara sebelumnya, Guido dos Santos mengonfirmasikan kepada Komisi bahwa orang yang ia lihat jatuh itu “besar dan botak”, suatu keterangan yang cocok dengan Brian Peters.⁹¹ Dalam wawancara yang direkam video dengan Komisi, Guido dos Santos dengan yakin mengidentifikasi rumah pertama di jalan ke Maliana sebagai tempat para wartawan dibunuh.

Olandino Guterres

98. Olandino Guterres adalah anggota pendukung UDT yang lari ke Timor Barat dari Balibó, dilatih di Haekesak di Timor Barat, dan kemudian dikembalikan ke Balibó bersama pasukan penyerang. Komisi mewawancarai Olandino Guterres pada Juni 2004 di Dili. Dia mengatakan kepada Komisi bahwa dia berdiri di belakang rumah yang ditempati para wartawan:

Ada suara, “Tembak! Maju!” Saya mulai kedengaran suara [tembakan] senjata AK. Mulai mereka tembak...sudah terang...saya mundur lagi ke belakang. Mundur sedikit ke belakang, saya lihat mereka semua masuk di dalam [rumah itu]. Saya juga masuk. Saya masuk ke sana. Saya lihat di situ sudah ada tiga wartawan Australia, di dalam rumah itu. Matinya di atas kursi, satu pas di jendela. Saat saya masih berdiri melihat, Yunus sendiri memerintahkan, “Heiho, keluar. Kamu ke sana. Jaga di bawah. Jangan di sini.”⁹²

* Dalam wawancara CAVR dengan Elias Lopes, seorang anggota UDT yang bergabung dengan pasukan yang menyerang Balibó, Elias Lopes mengatakan bahwa ia melihat seorang asing keluar dari rumah seorang diri, namun Elias Lopes bilang bahwa dia sendiri disuruh menyingkir oleh pasukan Indonesia, dan akhirnya mendengar suara tembakan. Wawancara CAVR dengan Elias Lopes, Kampung Merdeka, Comoro, Dili, 27 Juli 2004.

99. Olandino Guterres mengatakan kepada Komisi bahwa dia kemudian kembali ke rumah tersebut. Dia mengatakan bahwa semua pintu rumah tersebut telah dibuka dan dia bisa melihat apa yang terjadi di dalam rumah. Dia mendengar seorang tentara Indonesia mengatakan: “Jika kamu tidak keluar, saya akan lempar granat”:

Mungkin wartawan Australia mendengar kata “granat”, dan dia keluar dengan tangannya diangkat...saya dengar dia berkata: “I am sorry, I am tourist.” Ketika itu M45 yang menyuruh dia keluar. Ketika dia sudah berhasil menyuruh wartawan itu keluar, dia langsung menusuk wartawan itu dengan pisau komandonya. Orang kelima keluar dari kamar mandi...[dan] dia [M45] menikamnya di punggung.

100. Olandino menambahkan bahwa Kapten M44 kemudian memerintahkan M45 untuk mencabut sangkurnya.*

Tomás Gonçaves

101. Pada 1975, Tomás Gonçaves adalah komandan pasukan Apodeti di Balibó yang digabungkan ke pasukan Para-Komando pimpinan Kapten Ali Musa.† Pada April 1999, dia melarikan diri dari Makau setelah menolak memimpin sebuah kelompok milisi. Komisi mewawancarai Tomás Gonçaves pada Oktober 2003, Mei 2004, dan September 2004. Dia juga memberi kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974 – 1976 pada Desember 2003. Menurut Tomás Gonçaves, pada sekitar pukul 6 pagi ia melihat empat laki-laki keluar dari rumah itu, satu di depan dan tiga di belakangnya. Ia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan tetapi mengira mereka sedang menyerah. Kemudian ia melihat prajurit-prajurit menembak. Ia melihat M44, Ali Musa, dan Kirbiantoro dalam kelompok tentara yang mengepung rumah itu. Dia yakin bahwa mereka juga menembak, tetapi tidak bisa mengenali dengan tepat siapa yang menembak. Pada waktu itu tidak ada tembakan yang berasal dari posisi Fretilin/Falintil. Sambil melanjutkan menembak, para anggota tentara itu masuk rumah dan kemudian menyeret tubuh-tubuh para wartawan ke dalam, tempat mereka dibakar sampai hangus di atas tumpukan kayu yang dituangi bensin.

Kemungkinan urutan kejadian

102. Sementara sejumlah keterangan saksimata sulit dicocokkan satu sama lain, dan dalam beberapa hal keterangan beberapa saksi pada kesempatan yang berbeda juga berlawanan, komisi yakin bahwa berdasarkan kesaksian para saksimata dapat diambil

* Wawancara CAVR dengan Olandino Guterres, “M45” telah diidentifikasi sebagai anggota DPRD antara tahun 1992 dan 1997 di Baucau (Jill Jolliffe, op.cit., hal. 281-301).

† Dia mengatakan kepada Jill Jolliffe bahwa ketika itu dia bersama Kirbiantoro, tetapi dalam wawancaranya dengan Komisi dia secara konsisten mengatakan bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang menyerang dari belakang Unit Portugis dan kelompok ini dipimpin oleh Kapten Ali Musa.

keterangan yang koheren tentang apa yang terjadi pagi itu. Komisi yakin bahwa berikut ini adalah penjelasan yang dapat dipercaya yang didasarkan pada kesaksian-kesaksian itu.

103. Sekitar pukul 6 pagi, seorang wartawan, kemungkinan Brian Peters, ditembak di depan rumah pertama di jalan ke Maliana. Tembakan-tembakan ke arah rumah itu datang dari pasukan yang sedang menyerang melalui jalan ke Maliana dan hampir mencapai lapangan ketika Guido dos Santos melihat wartawan itu jatuh.* Satu kemungkinan mengapa sang wartawan berada di jalanan adalah karena dia baru saja turun dari bukit dengan membawa kamera dan berusaha kembali ke rumah saat secara tidak sengaja bertemu dengan pasukan yang sedang menyerang.† Dengan tangan ke atas, wartawan-wartawan di rumah itu berteriak, “Australia, Australia” selama sekitar dua menit. Tomás Gonçalves mengatakan bahwa ia melihat empat orang ditembaki pada pintu masuk rumah itu, satu orang di depan dan tiga orang di belakang. Pada saat itu tidak memungkinkan bagi dia untuk melihat wartawan pertama yang jatuh karena ketika hal itu terjadi Guido dos Santos masih berada di ujung lapangan dan Tomás Gonçalves tidak berada di sana. Apa yang dia lihat adalah ketika tentara Indonesia secara sengaja menembak ke arah wartawan yang masih ada dan memasuki rumah itu sambil terus menembak. Sebagian wartawan itu mungkin sudah tewas di depan pintu masuk itu, meskipun setidaknya-tidaknya satu orang melarikan diri ke dalam dan dibunuh di dalam rumah, kemungkinan oleh M45.

104. Komisi juga percaya bahwa anggota ABRI mendandani beberapa atau semua mayat para wartawan tersebut dengan pakaian seragam dan difoto dengan senapan mesin. Walaupun hanya ada sedikit kesamaan dalam keterangan para saksi yang diberikan kepada Komisi mengenai pembuangan mayat para wartawan, semua sumber menyatakan bahwa mereka dibakar di Balibó.⁹³

Kesimpulan

105. Komisi percaya bahwa keterangan ini konsisten dengan informasi yang tersedia. Keterangan ini memberi implikasi bahwa kelima wartawan tidak terbunuh dalam pertempuran atau sebagai akibat berada dalam posisi tidak beruntung dari operasi Indonesia untuk mengambil alih Balibó Selain usaha para wartawan untuk memperkenalkan diri mereka kepada tentara Indonesia, ada bukti yang perlu dipertimbangkan bahwa pasukan penyerang telah mengetahui sebelumnya tentang kehadiran para wartawan Australia di Balibó, termasuk pengakuan dari Jenderal Moerdani bahwa dia telah menerima laporan tentang dampak dari penyerangan tersebut.⁹⁴ Komisi juga percaya bahwa keterangan resmi dan semi-resmi Indonesia tentang kejadian di Balibó yang menyatakan bahwa anggota pasukan penyerang

.....
* Kesaksian Lucas Jeronimo, walaupun pernyataannya tidak direkam sebagai bukti, mendukung hipotesis ini.

† Kesaksian Lucas Jeronimo bahwa ia melihat wartawan yang memfilmkan kemudian jatuh juga cocok dengan versi kejadian ini. Lihat artikel yang dikutip dalam laporan Tom Sherman, *Report on the Deaths of Australian-based Journalists in East Timor in 1975, 1996*, halaman 31-32.

menemukan mayat-mayat para wartawan setelah mereka menguasai kota adalah tidak konsisten dengan bukti apa pun yang telah diterima Komisi.⁹⁵ Komisi tidak mendaku bahwa berdasarkan penyelidikannya yang terbatas tentang kejadian ini Komisi berada dalam posisi yang memungkinkannya menarik kesimpulan pasti tentang apa yang terjadi di Balibó pada 16 Oktober 1975. Namun, Komisi percaya bahwa temuan-temuannya mendukung investigasi lebih lanjut tentang kebenaran elusif kasus ini.

Pembunuhan di luar hukum oleh militer Indonesia selama invasi Dili pada 7 – 8 Desember 1975

106. Pasukan Indonesia melancarkan invasi besar-besaran ke Dili pada saat fajar, Minggu, 7 Desember 1975. Kapal-kapal perang Indonesia menembakkan mortir dan meriam ke Dili selama sekitar satu jam, dan setelah itu pasukan terjun payung Indonesia mendarat di tengah-tengah Dili dan marinir Indonesia mendarat di Kampung Alor (Dom Aleixo, Dili), di barat pusat kota. Pasukan Kopassandha dibagi menjadi tiga tim, yang masing-masing ditugasi untuk mengamankan lokasi strategis tertentu.

107. Pada pukul 04.30, beberapa ratus marinir Indonesia dalam tank-tank amfibi dan pengangkut personel mendarat di pantai Kampung Alor. Sesaat sebelum fajar pada 7 Desember, serangan mendadak pertama oleh sembilan pesawat tempur Indonesia membentuk formasi penerjunan di atas Pulau Ataúro, terbang ke barat ke arah Selat Wetar, dan mendekati Dili dari arah timur. Pada pukul 05.45, pasukan payung mulai diterjunkan. Pasukan terjun payung Indonesia yang mendarat di sebelah barat kantor Gubernur di sepanjang Jalan José Maria Marques mendapat perlawanan sengit. Di wilayah itu terdapat beberapa pos milisi Fretilin/Falintil. Salah satu dari pos-pos ini berada di lantai dasar gedung Palang Merah. Dari sanalah kelompok milisi Fretilin/Falintil terlibat baku tembak yang sengit dengan pasukan terjun payung Indonesia.

Pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil etnis Cina di Colmera, 7 Desember 1975

108. Pada 7 Desember pagi, pasukan Indonesia mendekati bangunan Toko Lay, yang terletak di sebelah bangunan Palang Merah di Jalan José Maria Marques. Seorang tentara terjun payung Indonesia yang parasutnya tersangkut di atap bangunan itu beberapa saat sebelumnya, mati tergantung di depan bangunan itu. Pasukan Indonesia memerintahkan para penghuni bangunan Toko Lay untuk keluar. Komisi menerima informasi bahwa di bangunan tersebut tinggal sekitar 20 orang, semuanya etnis Cina.⁹⁶ Seorang lelaki etnis Cina bernama Tsam Yi Tin dan anak lelakinya (yang dipercaya bernama Tsam Meu Tang) keluar dari bangunan di sebelah Toko Lay. Komisi mendapat informasi bahwa prajurit Indonesia menembak Tsam Yi Tin hingga tewas dan bahwa putranya terluka karena terkena peluru tetapi ia selamat.⁹⁷ Orang-orang lain yang tinggal di Toko Lay kemudian dibawa ke pelabuhan.⁹⁸

109. Komisi mendapat bukti menguatkan lain mengenai insiden ini. Herminio da Silva da Costa menuturkan kepada Komisi bahwa ketika ia menemani Brigadir Jenderal Benny Moerdani keliling kota tak lama kemudian pada hari itu atau hari berikutnya, mereka bertemu dengan seorang perempuan etnis Cina di dekat Toko Lay yang suaminya telah tertembak. Herminio da Costa mengatakan kepada Komisi bahwa perempuan itu meminta bantuan untuk menguburkan suaminya dan Moerdani menjawab: “Maafkan saya kalau terjadi kesalahan. Saya yang bertanggung jawab, dan saya minta maaf.”⁹⁹

Tabel 2: Para korban di sebelah Toko Lay, pagi 7 Desember 1975, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Pekerjaan | Data Diri | Pelanggaran |
|------------------|--------------|------------------------|-------------|
| 1. Tsam Yi Tin | Penjaga toko | Usia ~50, dari Turisca | Terbunuh |
| 2. Tsam Meu Yang | - | Putra Tsam Yi Tin | Cedera |

110. Pagi itu pasukan Indonesia di Colmera memerintahkan semua penghuni untuk keluar dari rumah dan tempat usaha mereka. Menurut kesaksian saksimata, prajurit Indonesia yang mengenakan baret hijau mengeledah rumah mereka mencari senjata. Sementara melakukan pemeriksaan ini, pasukan itu mendapati sekelompok warga etnis Cina bersembunyi di dalam saluran air di belakang rumah Li Nheu Ki, di Jalan Sebastião da Costa. Seorang saksi menuturkan kepada Komisi bahwa ia mendengar ada orang-orang yang dibunuh di sebuah rumah di dekat situ dan ingin menguburkan mereka. Ketika ia melongok keluar dari pintu rumah tempatnya tinggal, ia melihat banyak mayat, tetapi ia takut dan kembali masuk rumah.¹⁰⁰

Tabel 3: Para korban di rumah Li Nheu Ki, pagi 7 Desember 1975, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Pekerjaan | Data Diri | Pelanggaran |
|--------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 1. Li Nheu Ki | - | Sekitar 60 thn | Terbunuh |
| 2. Pu Kim Seong | pegawai San Tai Hoo | Sekitar 48 thn | Terbunuh |
| 3. Lay Siu Siong | - | - | Terbunuh |
| 4. Yong Yung Nhang | - | Sekitar 60 thn | Terbunuh |
| 5. Istri Yong Yung Nhang | - | Sekitar 60 thn | Terbunuh |

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|----------|
| 6. A Fa [Lay Kim Fa?] | Koki/penjaga toko | Sekitar 22 thn | Terbunuh |
| 7. Li Chap Pin | Tukang kayu | Sekitar 30 thn | Terbunuh |
| 8. Jong Kui Jung | Istri Li Chap Pin | Sekitar 30 thn | Terbunuh |
| 9. Li Chap Kang | - | Sekitar 40 thn | Terbunuh |

111. Komisi telah menerima informasi tentang paling sedikit lima orang etnis Cina yang dibunuh di Colmera pada 7 Desember. Sekitar tengah hari seorang pengusaha bernama Lay Kim Chang, 38 tahun, keluar dari tokonya dan segera ditembak oleh prajurit Indonesia, yang kemudian mengambil jam tangannya yang mahal. Pada sore harinya, seorang informan tentara Indonesia mengidentifikasi pemilik toko bernama Lay Chung To, sekitar 60 tahun, sebagai anggota Fretilin dan memiliki bendera Fretilin. Ia langsung ditembak mati. Tiga orang lainnya juga dilaporkan telah dieksekusi.¹⁰¹

Tabel 4: Warga etnis Cina lainnya yang terbunuh, pagi 7 Desember 1975, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Pekerjaan | Data Diri | Pelanggaran |
|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1. Lay Kim Chang | Pemilik toko | Sekitar 38 thn | Terbunuh |
| 2. Lay Chung To | Pemilik toko | Sekitar 60 thn | Terbunuh |
| 3. Jong KongYi | Pengusaha | Sekitar 60 thn | Terbunuh |
| 4. Wong Seu Fa | Pegawai Fa Qui | Sekitar 50 thn | Terbunuh |
| 5. Lay Si Leong | - | - | Terbunuh |

112. Warga etnis Cina yang tinggal di Toko Lay dibawa ke pantai. Pada 1984, seorang lelaki bernama Chong Kui Yan menuturkan kepada Amnesty International bahwa penghuni Toko Lay dibawa ke Klub olahraga, di bawah tolong senjata, kemudian digiring ke pintu masuk pelabuhan. Di sana mereka kembali diancam. Perempuan dan anak-anak disuruh pergi ke sekolah Cina di Bairo Central dan kelompok lelaki yang terdiri atas 16 orang diperintahkan untuk menggali kuburan besar di taman, tempat prajurit-prajurit Indonesia yang mati kemudian dikuburkan.¹⁰²

Pembunuhan di gedung Assistencia, 7 Desember 1975

113. Ketika Indonesia menginvasi Dili, banyak keluarga yang tinggal di gedung kantor Departemen Sosial Portugis (Assistencia) di sisi tenggara persimpangan Jalan Albuquerque dan Jalan Caicoli. Keluarga-keluarga ini kemudian mengungsi di gedung Assistencia yang baru itu karena rumah-rumah mereka di Villa Verde dan kompleks-kompleks pemukiman lainnya telah dibakar pada Agustus ketika terjadi konflik bersenjata antara UDT dan Fretilin.

114. Pada pagi hari 7 Desember, para simpatisan Fretilin yang sebelumnya telah menerima pelatihan militer, berkumpul di dalam bangunan Kompi Infanteri Pemburu (Companhia 15) di Caicoli untuk mencari senjata dan amunisi. Komandan Companhia 15 tidak hadir ketika itu. Alberto de Oliveira Camara menuturkan kepada Komisi bahwa anggota milisi Fretilin/Falintil menembaki para prajurit terjun payung Indonesia yang tengah melayang turun. Pertempuran itu terus berlanjut hingga anggota Fretilin/Falintil kehabisan peluru dan akhirnya melarikan diri.¹⁰³

115. Siangnya, prajurit Indonesia mendekati gedung Assistencia. Mereka menemukan seorang penerjun payung Indonesia tersangkut pada kabel listrik paginya dan telah ditembak mati. Menurut Francisco da Cunha, mantan polisi militer Portugis:

Ada seorang kapten yang meninggal karena tembakan dari Falintil yang ada di Companhia Casa Quinze-Caicoli. Pada saat itu juga kami mulai baku tembak dengan ABRI/TNI. Karena kekuatan kami sudah tidak bisa bertahan lagi, maka kami mundur untuk gabung bersama Companhia Balide.²¹⁰⁴

116. Para prajurit kemudian menurunkan prajurit yang mati itu. Ketika itu, bendera Fretilin berkibar di tiang dekat garasi, di bagian gedung Assistencia yang lama. Setelah mengamankan daerah itu, para prajurit itu kemudian membawa rekan mereka yang mati ke tiang bendera dan menurunkan bendera Fretilin. Mereka kemudian memerintahkan semua warga sipil untuk keluar dari gedung Assistencia yang baru.

117. Keluarga Bernardo Moniz tinggal di lantai kedua di bagian belakang bangunan itu, sehingga mereka salah satu yang terakhir meninggalkan gedung. Anak perempuan Bernardo, Felismina dos Santos da Conceição, yang ketika itu berusia 12 tahun, menuturkan kepada Komisi bahwa dari lantai dua bangunan itu ia memandang ke seberang jalan dan bisa melihat dua prajurit Indonesia dan seorang prajurit Fretilin/Falintil yang telah mati berada di dekat tiang bendera, di sebelah garasi ambulans di gedung Assistencia yang lama.¹⁰⁵

118. Para prajurit Indonesia memerintahkan warga sipil untuk berkumpul di lapangan di seberang gedung Assistencia baru. Mereka juga memerintahkan warga sipil yang berasal dari lingkungan Villa Verde untuk berkumpul di lapangan. Francisco Soriano menuturkan kepada Komisi bahwa ia dan keluarganya bersembunyi di rumah

anggota Polisi Militer Portugis bernama Santos karena bangunan tersebut kokoh dan dapat menahan peluru. Tetapi, pada siang harinya rumah itu tertembak dan semua penghuninya keluar. Para prajurit Indonesia menyuruh mereka berkumpul di lapangan di seberang gedung Assistencia.*

119. Para prajurit memisahkan laki-laki dari perempuan dan anak-anak. Para perempuan disuruh berdoa dan para prajurit Indonesia itu memeriksa kelompok para lelaki yang mencapai 80 orang.† Kemudian mereka menyuruh para lelaki pergi ke gedung Companhia 15, di sebelah gedung Assistencia, tempat mereka diperintahkan mengeluarkan semua barang di dalam gedung. Felismina dos Santos da Conceição, yang berada di lapangan bersama kelompok perempuan dan anak-anak lainnya, menuturkan kepada Komisi bahwa ia melihat ayahnya dan Sersan Mesquita mengangkut barang-barang keluar dari gedung Companhia 15. Setelah itu, para lelaki digiring ke samping gedung. Francisco Soriano menuturkan kepada Komisi bahwa ia melihat dua penerjun payung Indonesia yang sudah mati di sana.¹⁰⁶ Para lelaki disuruh berbaris. Francisco Soriano menuturkan kepada Komisi:

[Setelah] keluar dari Companhia, ABRI menyuruh kami berbaris... ABRI menodong senjata ke arah kami dan menyuruh kami berjalan dan kami mulai berbaris. Tiga barisan atau tiga lapisan. Kami disuruh berbaris dan kami juga tidak mengerti bahasa. Sesudah kami berbaris mereka [ABRI] berdiskusi. Saya hanya melihat tulisan di baju mereka – 501. Topi hijau... Kami berbaris lapis tiga dan barisannya panjang.¹⁰⁷

120. Para prajurit Indonesia itu berdiskusi selama kurang-lebih 10 sampai 15 menit. Tiga orang prajurit kemudian mengarahkan senjatanya ke arah kelompok lelaki Timor-Leste. Ketika melihat ini, Francisco Soriano berbalik dan lari. Prajurit-prajurit itu kemudian melepaskan tembakan ke para lelaki tersebut. Sambil terus berlari, Francisco Soriano dapat melihat dua temannya telah tertembak. Domingos Pinto Faria tertembak di bagian kepala dan terjatuh. Manuel tertembak di bagian paha. Setelah lari sekitar 100 meter, Francisco pun tertembak di bagian punggung.

121. Domingos Soares menuturkan kepada Komisi bahwa ia berada di antara kelompok laki-laki ketika penembakan itu terjadi. Ia menyatakan:

Saya berada di barisan pertama. Setelah saya jatuh, [baru saya sadari] bahwa peluru kena tepat di tangan saya. Pada saat itu saya berbaris bersama seorang teman Cina, yang kena peluru juga dan jatuh mati di

* Wawancara CAVR dengan Francisco Soriano, Dili, 4 Juli 2004. Lihat juga Wawancara CAVR dengan Alberto de Oliveira Camara, Dili 17 Agustus 2004, yang menuturkan kepada Komisi bahwa ia mendingar dari Joséfina Pereira Noronha bahwa suaminya, Lourenço Pereira, telah ditembak mati oleh prajurit Indonesia di Villa Verde pada pagi hari, 7 Desember 1975.

† CAVR telah menerima berbagai informasi tentang jumlah laki-laki yang terlibat. Francisco Soriano, yang diwawancarai pada tanggal 4 Juli 2004, menuturkan kepada Komisi bahwa ketika itu ada 60-80 laki-laki di sana.

atas tubuh saya. Dan saya melihat banyak orang mati. Tapi saya hanya mengenal beberapa nama: Jacinto Candido dan Tomás Conceição—dua-duanya adalah guru saya—dan Domingos Urbano.¹⁰⁸

122. Felismina dos Santos da Conceição menuturkan kepada Komisi bahwa tak lama setelah sekelompok laki-laki dibawa ke gedung *Companhia 15*, ia dapat mendengar suara tembakan yang berlangsung selama 15 sampai 20 menit. Dia juga dapat mendengar beberapa ledakan granat. Setelah beberapa lama, seorang teman Felismina, gadis bernama Isabel, berdiri dan membawa air ke lokasi penembakan. Ketika Isabel tiba di tempat itu, para prajurit Indonesia telah beranjak pergi ke arah Gedung Sang Tai Hoo, di Colmera. Isabel kembali ke kelompok perempuan dan melaporkan bahwa semua laki-laki telah terbunuh.

123. Mendengar penuturan itu, Felismina dan beberapa perempuan lainnya pergi melihat apa yang terjadi. Ketika Felismina sampai di Gedung Assistencia, ia melihat semua lelaki telah mati tertembak dan bagian tubuh mereka berserakan di mana-mana. Felismina menemukan saudara lelakinya, Jacinto Ferreira Simões, yang berusia 17 tahun:

Saya segera mengangkat kepala kakak saya dan menaruhnya di atas pangkuan saya. Saya memberi air minum kepada kakak saya. Tak lama kemudian pangkuanku basah. Setelah itu saya memperhatikan bahwa air yang saya berikan kepada kakak saya keluar dari lehernya dan membasahi pangkuan saya. Tak lama kemudian kakak saya meninggal dunia di atas pangkuan saya.¹⁰⁹

124. Felismina dan teman-temannya kembali ke lapangan dan bersama perempuan dan anak-anak lainnya mereka berangkat menuju Villa Verde. Di tengah jalan dia melihat ayahnya, Bernardo Moniz, datang dari arah markas Polisi Militer di Jalan Albuquerque. Tubuhnya bersimbah darah. Bernardo Moniz mengatakan pada putrinya bahwa ia tidak terluka; darah itu berasal dari lelaki lain yang telah dibunuh.

125. Komisi mendapat informasi dari beberapa informan tentang jumlah korban di gedung Assistencia. Angkanya berkisar antara 23 hingga yang terbanyak sekitar 60 – 70 orang.* Komisi berhasil mengidentifikasi beberapa korban berikut:

* Wawancara CAVR dengan Alexandrino do Rego, Dili, 22 Agustus 2004. Ia mengatakan bahwa ia menghitung ada 23 mayat di tempat kejadian. Felismina dos Santos da Conceição, diwawancarai pada November 2003, dan Filomeno Gomes, diwawancarai tanggal 25 Juni 2004, mengatakan bahwa mereka melihat “puluhan” korban. A3, yang diwawancarai tanggal 16 Agustus 2004, mengatakan di sana ada 40 korban, baik laki-laki dan perempuan. Lihat James Dunn, *Timor: A People Betrayed*, Jacaranda Press: Milton, 1983, p. 284. Lihat juga Amnesty International, *East Timor Violations* hal. 27-29.

Tabel 5: Korban yang berhasil diidentifikasi dari Gedung Assistencia, Caicoli, yang dilaporkan kepada Komisi

| Nama | Pekerjaan | Data Diri | Pelanggaran |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Domingos Pinto Faria | - | - | Terbunuh |
| 2. Domingos Xavier | Polisi militer | dari Viqueque | Terbunuh |
| 3. Antonio Mesquita | Sersan dua | - | Terbunuh |
| 4. Manuel | Pelayan di rumah Santos | - | Terbunuh |
| 5. Graciano de Carvalho | Perawat | - | Terbunuh |
| 6. Rosa Lay | Supir ambulans | - | Terbunuh |
| 7. Jacinto Ferreira Simoes | - | 17 tahun | Terbunuh |
| 8. Jacinto Candido | Guru | - | Terbunuh |
| 9. Tomas Conceição | Guru | - | Terbunuh |
| 10. Silvino das Neves | - | - | Terbunuh |
| 11. Luis Antonio Salsinha | - | - | Cedera |
| 12. Domingos Urbano | - | - | Cedera |
| 13. Antonio de Araújo | Mantan Tropas | - | Cedera |
| 14. Francisco Suriano | anggota milisi Fretilin | 17 tahun, dari Dili | ditembak di belakang |
| 15. Carlos Afonso | anggota Unetim | - | ditembak di tangan |
| 16. Domingos | - | - | - |
| 17. José de Carvalho | - | - | - |
| 18. Cico Badak | Turis | - | Cedera |
| 19. Bernardo Moniz | - | meninggal 1981 | - |
| 20. João Brito | anggota milisi Fretilin | dari Ermera | - |
| 21. Domingos Soares | - | 9 tahun | Cedera |

126. Domingos Freitas menuturkan kepada Komisi bahwa dua hari setelah Indonesia menginvasi Dili, dia pergi dengan seorang perempuan bernama Candida dan anaknya untuk mencari suami Candida, yang merupakan anggota Polisi Militer Portugis. Di belakang gedung Companhia 15 mereka menemukan puluhan mayat yang mulai membusuk yang sebagian telah dimakan binatang.¹¹⁰

127. Pada 9 Desember, anggota militer Indonesia memerintahkan beberapa warga sipil Timor-Leste untuk membakar mayat-mayat yang ada di gedung Companhia 15. Menurut Filomeno Gomes, anggota militer Indonesia memaksanya membakar mayat-mayat yang membusuk itu di suatu tempat di antara gedung Companhia 15 dengan kantor EDTL (Eletricidade Timor-Leste) yang sekarang.¹¹¹ Seperti halnya Filomeno, Alexandrino do Rêgo menuturkan kepada Komisi bahwa ia membakar 23 mayat di sebelah gedung Assistencia. Ia hanya dapat mengidentifikasi dua mayat: jenazah Rosa Lay, seorang sopir ambulans, dan Graciano de Carvalho, seorang perawat.¹¹²

Mayat-mayat di markas Polisi Militer Portugis

128. Komisi mendapat informasi tentang mayat-mayat yang dilihat di markas Polisi Militer, di sebelah Gedung Assistencia di Jalan Albuquerque. Sebastiana Henrique Guterres Soares Belo, ketika itu anggota Unetim, menuturkan kepada Komisi bahwa pada 8 Desember 1975 ia pergi dari Taibessi ke Caicoli untuk mencari makanan. Ia mengatakan bahwa ia melihat dua truk Hino memasuki kompleks Polisi Militer. Karena penasaran tentang apa yang terjadi di dalam kompleks itu, Sebastiana memanjat pohon sehingga ia dapat melihat ke dalam kompleks. Di sana, ia melihat para prajurit Indonesia dan warga sipil Timor-Leste menaikkan mayat-mayat ke atas truk.¹¹³

Pembunuhan di Matadouro, 7 Desember 1975

129. Pada sore hari, 7 Desember, pasukan Indonesia mendekati Gedung Matadouro, yaitu rumah potong hewan semasa Portugis berkuasa, yang terletak 400 meter di selatan gedung Assistencia di ujung Jalan Albuquerque. Setelah merebut kekuasaan pada Agustus 1975, Fretilin mendirikan pos milisi di sana.¹¹⁴

130. Komisi mendapat berbagai informasi tentang orang-orang yang dieksekusi di sekitar gedung ini, dengan beberapa variasi dalam perinciannya. Seorang informan menuturkan kepada Komisi bahwa setelah pasukan Indonesia mendarat pada 7 Desember, penduduk setempat tetap tinggal di daerah tersebut dan sejumlah laki-laki membantu pasukan Indonesia yang ketika itu telah mendirikan pos di bukit di atas daerah tersebut.¹¹⁵

131. Agak sore, pada 7 Desember, sejumlah perempuan, anak-anak, dan orang tua yang masih berada di lapangan di seberang Gedung Assistencia pergi ke selatan, ke Matadouro. Tapi, menjelang petang, pasukan Indonesia memerintahkan para penduduk setempat keluar dari rumah mereka. Menurut Maria Filomena Godinho,

ayahnya menunjukkan “kartu keanggotaan dan bendera Apodeti” kepada tentara Indonesia. Maria Filomena menuturkan kepada Komisi bahwa menjelang petang 7 Desember:

ABRI langsung mendatangi rumah kami dan memaksa kami keluar... Di Matadouro kami dibagi dalam dua kelompok, yaitu laki-laki dalam satu kelompok dan perempuan dalam kelompok lainnya. Lalu para laki-laki ditembak mati. Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri ketika ABRI menembak mereka.¹¹⁶

132. Tiga orang terbunuh bersama-sama, termasuk ayah Maria Filomena, Vicente Godinho, kakak laki-lakinya, Teodoro Godinho, dan pemilik rumah tempat mereka tinggal, Lourenço. Menurut informan lainnya:

Empat orang anggota ABRI mendatangi rumah korban Lourenço, langsung memukul Lourenço bersama dua orang temannya, yaitu Teodoro Godinho, dan Vicente Godinho dengan menggunakan popor senjata. Pada saat itu anak Lourenço yang bernama Domingos Pereira, datang memohon kepada para pelaku agar jangan menyiksa para korban. Maka salah seorang dari empat anggota ABRI tersebut menyeret Lourenço, Teodoro, dan Vicente ke halaman rumah dan menembak mati mereka. Lalu datang lagi Francisco Xavier yang pada saat itu langsung menentang tindakan para pelaku. Maka pada saat itu para pelaku juga langsung menembak mati korban Francisco Xavier di halaman rumah di Matadouro.¹¹⁷

133. Acacio da Costa Carvalho menuturkan kepada Komisi bahwa pada 10 Desember 1975 ia mendengar beberapa dari anggota keluarganya telah ditembak mati oleh tentara Indonesia pada pukul 16.00, 8 Desember. Acacio mendengar tentang pembunuhan-pembunuhan itu dari ibu dan tantenya, yang menyaksikan kejadian itu. Mereka menggambarkan bagaimana prajurit Indonesia mendirikan pos di atas bukit, di selatan Matadouro, memanggil para lelaki keluar rumah, mengeledah tiap rumah, dan kemudian mengeksekusi tiga orang: ayah Acacio, Julio da Costa; salah seorang pamannya; dan Francisco Xavier (juga dikenal sebagai Mausale).¹¹⁸

134. Saksi lainnya memberikan informasi tentang tiga orang lainnya yang dibunuh di Matadouro pada sore hari, 8 Desember.

Pada tanggal 8 Desember jam 4.00 sore, José dos Santos, yang baru keluar dari rumah sakit [di Lahane], bersama dua orang temannya, yaitu Manuel Febu dan Duarte da Silva, dibunuh oleh ABRI/TNI di Matadouro. Kejadian ini disaksikan oleh anak saya bernama Liberatu dos Reis Soriano. Mayat-mayat mereka tidak dikuburkan.¹¹⁹

135. Sejumlah informan lain menuturkan kepada Komisi bahwa mereka mendengar tentang beberapa eksekusi di Matadouro. Salah satu informan berkata bahwa ia

bersama sekelompok prajurit Kostrad yang tiba di Matadouro sekitar pukul 16.00, 8 Desember, melihat tiga mayat di lokasi itu.¹²⁰

136. Komisi menemukan bahwa orang-orang yang disebut di bawah ini, dibunuh oleh prajurit Indonesia di sekitar gedung Matadouro:

Tabel 6: Korban yang berhasil diidentifikasi di sekitar Matadouro pada 7 - 8 Desember 1975, yang dilaporkan kepada Komisi*

| Nama | Pekerjaan | Data Diri | Pelanggaran |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| 1. Vicente Godinho | Pegawai negeri | usia sekitar 50 tahun | Dibunuh |
| 2. Teodoro Godinho | - | Putra Vicente Godinho | Dibunuh |
| 3. Laurencô da Conceição | - | Rumah di dekat Matadouro | Dibunuh |
| 4. Francisco Xavier Luis Pereira | - | Sanak keluarga no.5 | Dibunuh |
| 5. Julio da Costa | - | usia sekitar 50 tahun | Dibunuh |
| 6. José dos Santos | - | - | Dibunuh |
| 7. Duarte dos Santos | - | - | Dibunuh |
| 8. Manuel Febu | - | - | Dibunuh |

Pembunuhan di Sungai Maloa, 7 Desember 1975

137. João Dias Ximenes menuturkan kepada Komisi bahwa pada pagi hari, 7 Desember, ia sedang berada di rumahnya di Bairro Pite. Dia berkata bahwa ia dan keluarganya tetap berada di rumah mereka sepanjang pagi itu. Namun, pada pukul 14.00, pasukan Indonesia memasuki Bairro Pite dan menyuruh setiap orang keluar dari rumah masing-masing dan berbaris. Sekitar pukul 15.00, penduduk setempat mendengar bahwa sejumlah warga sipil telah dibunuh di Sungai Maloa (Bairro Pite, Dom Aleixo, Dili). Pada pukul 16.00, João Ximenes menemani pasukan Indonesia ke lokasi itu. Ia melihat delapan mayat lelaki, tetapi hanya satu yang dapat dikenalnya, yaitu Crisogno Fraga. Pasukan Indonesia menyuruh warga sipil menyiram mayat-mayat itu dengan minyak tanah kemudian membakarnya. Menurut João Ximenes, kedelapan laki-laki itu dibunuh karena seorang prajurit Indonesia telah dibunuh oleh Fretilin/Falintil.

* Kemungkinan korban lainnya adalah Antonio dos Reis, usia 30 tahun; Zeca; dan Inacio, seorang mantan anggota Polisi Militer dari Viqueque. Lihat wawancara CAVR dengan A3, 16 Agustus 2004, Dili; Calistro de Jesus Brito, 29 Juni 2004, Dili; dan Iria de Araújo, 4 Agustus 2004, Dili.

138. Informan lainnya juga memberikan informasi tentang mayat-mayat di tempat yang sama. Felismina dos Santos da Conceição menuturkan kepada Komisi bahwa pada sore hari 8 Desember, ia berada di tengah-tengah sekelompok perempuan yang pindah dari Villa Verde ke Guarda Colmera, di Tuanalaran. Di dekat Guarda Colmera, kelompok perempuan itu berpapasan dengan prajurit Indonesia. Mereka membawa serta salah satu perempuan di dalam mobil dan membawanya pergi. Setelah itu, para prajurit itu membawa lima laki-laki bersama mereka. Ketika kelima laki-laki itu kembali, mereka bercerita kepada kelompok perempuan itu bahwa para prajurit telah memaksa mereka menguburkan sekelompok warga sipil yang telah mati di Sungai Maloa.¹²¹ Hal yang sama diceritakan Iria de Araújo kepada Komisi bahwa pada 8 Desember sore, setelah eksekusi massal di Ailok Laran, Bairo Pite (Dom Aleixo, Dili), dia berjalan ke Sungai Maloa di Bairo Pite dan melihat sejumlah mayat di Sungai Maloa.¹²²

Dermaga Dili, 8 Desember 1975

139. Pada 7 Desember malam, pasukan terjun payung Indonesia dari Kostrad dan Kopassandha tinggal di gedung yang sekarang ini adalah Hotel Timor, tetapi ketika itu masih belum selesai dibangun, yang menghadap ke pelabuhan Dili. Seorang informan orang Timor menceritakan kepada Komisi bahwa pada 7 Desember itu, ia dan beberapa temannya yang telah ditahan oleh Fretilin di markas polisi dekat Mercado Municipal (pada zaman Indonesia dikenal dengan nama Merkado Lama), tidur di Hotel Timor. Di sana mereka bertemu dengan komandan peleton tentara Indonesia bernama F. Sinaga.¹²³ Pada pagi harinya, yaitu 8 Desember, ada sejumlah besar anggota Kostrad dan Kopassandha di bangunan itu, setelah pada malam harinya tidur di bangunan kosong itu.

140. Seorang saksi, salah satu dari enam bekas tahanan Fretilin yang bermalam di taman kecil di depan Hotel Timor, menuturkan kepada Komisi bahwa pada pukul 06.00, 8 Desember, ia mendekati seorang prajurit di dekat taman dan meminta izin mencuci muka. Prajurit itu mengizinkannya pergi ke taman besar yang berjarak 50 meter ke barat. Saksi itu berkata bahwa di taman yang besar itu ia melihat mayat orang Timor berusia sekitar 25 tahun, mengenakan pakaian sipil, tergeletak tengkurap di tanah.¹²⁴

141. Pada 8 Desember pagi, sekelompok warga etnis Cina yang terdiri atas 16 orang laki-laki, yang telah ditahan di kantor beacukai pada malam sebelumnya, diperintahkan oleh tentara Indonesia untuk melanjutkan menggali lubang di taman itu dan kemudian mengubur 20 tentara Indonesia.¹²⁵

142. 8 Desember pagi itu, tentara Indonesia menyuruh warga sipil di berbagai lokasi di pusat Dili untuk pergi ke pelabuhan. Seorang informan menuturkan kepada Komisi bahwa ketika itu ia sedang berada di Colmera dengan sekitar 20 warga etnis Cina yang bermaksud pergi ke gedung konsulat Taiwan. Kelompok itu berjalan dari Colmera ke tepi laut. Di sana mereka dihentikan oleh tentara Indonesia dan

disuruh tetap tinggal di jalan. “Kami duduk di sana, menghadap ke laut. Kami tidak diizinkan menoleh ke arah hotel. Ada banyak tentara di situ.”

143. Beberapa saat setelah pukul 08.00 pada 8 Desember, keluarga Perdana Menteri RDTL dan Wakil Presiden Fretilin, Nicolau Lobato, termasuk istrinya, Isabel, berada di sebuah rumah di sudut Jalan Fernando dan Jalan Formosa, persis di belakang Bank Nacional Ultramarino (BNU). Kelompok yang terdiri atas 15 orang ini memutuskan berjalan ke Motael, mencari perlindungan ke kediaman Pastor Monteiro. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Laurinda Guterres Barreto Ximenes, adik bungsu Isabel Lobato, menceritakan kepada surat kabar lokal:

Kami berusaha menyelamatkan diri menuju gereja di Motael. Ketika tiba di pertigaan gedung Sporting, pelabuhan Dili telah dipenuhi dengan tentara Indonesia. Rombongan kami diperintah untuk berkumpul di Taman Camara Ecclesiastica.¹²⁶

144. Beberapa saksi ingat pernah melihat Isabel Lobato di depan pelabuhan. Salah seorang berkata: “[Saya] melihat istri Nicolau datang... Ia mengenakan sehelai *tais*.”¹²⁷

145. Komisi menerima informasi dari sejumlah sumber mengenai perlakuan anggota militer Indonesia terhadap warga sipil yang dikumpulkan di depan gedung yang kini Hotel Timor. Seorang sumber mengatakan bahwa pasukan Indonesia memberi warga sipil minuman dan rokok, dan bertanya siapa saja yang menjadi anggota Fretilin:

[Mereka] tanya, ‘siapa Fretilin angkat tangan?’ ‘Ada orang tahu bahasa [Indonesia]?’... Tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan, tetapi ada seseorang yang bisa berbicara bahasa Indonesia dan mereka menunjuk [siapa saja anggota Fretilin].¹²⁸

146. Komisi berhasil menetapkan bahwa beberapa anggota Apodeti yang telah ditahan oleh Fretilin sejak Oktober hingga 7 Desember, yang tidur di gedung Intendencia dan di sekitar pelabuhan malam sebelumnya, bertindak sebagai penerjemah bagi tentara Indonesia pada 8 Desember. Komisi juga berpendapat bahwa beberapa bekas tahanan itu menunjuk beberapa orang dalam kelompok besar warga sipil itu kepada tentara Indonesia. Para warga sipil itu ditunjuk atas dasar keanggotaan mereka dalam Fretilin atau dalam organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan Fretilin (misalnya Unetim), atau karena memiliki hubungan dengan pemimpin Fretilin terkemuka. Frederico dos Santos Almeida, yang ditahan oleh Fretilin di Comarca Balide hingga 7 Desember, menuturkan kepada Komisi:

* Wawancara CAVR dengan saksi tanpa nama [W2], 24 Agustus 2004, Dili. Informan lainnya menuturkan kepada Komisi bahwa ia tiba di Distrik Colmera sekitar pukul 12.30 pada 8 Desember dan melihat tentara Indonesia memerintahkan orang untuk menjarah toko-toko. Wawancara CAVR dengan Alexandrino do Rego, 4 Februari 2004, Dili. Lihat juga Wawancara CAVR dengan Erminio da Silva da Costa, 9 Agustus 2004, Jakarta.

Kami sampai di sana [Hotel Timor]. Mereka menyuruh kami untuk berkumpul di depan hotel. Tidak lama kemudian istrinya Dr. Gonçalves tiba dan duduk bersama kami di sana. Tak lama kemudian Bapak [ABRI] mengambil Arnaldo [dos Reis Araújo] ke dalam [hotel]. Kemudian mereka mengambil istri Nicolau dan dibawa ke pantai.'

147. Komisi merasa yakin bahwa Isabel Lobato dikawal masuk ke areal pelabuhan melalui pintu gerbang timur.[†] Beberapa menit kemudian terdengar suara tembakan. Sejumlah anggota Fretilin atau kerabat anggota Fretilin lainnya juga disisihkan dari kumpulan orang-orang pada waktu itu dan semuanya dikawal masuk ke areal pelabuhan. Menurut Herminio da Silva da Costa:

Yang saya lihat dibawa [ke dalam pelabuhan] itu Senhora Isabel. Anaknya masih menangis, menarik sarung ibunya. Kemudian Rosa Bonaparte, Borja da Costa, dan satu [orang] lagi [diantar ke dalam pelabuhan]. Ada tiga atau empat orang.¹²⁹

148. Seorang saksimata menuturkan kepada Komisi bahwa tak lama setelah Isabel Lobato dibawa masuk ke pelabuhan, ia didekati oleh saudari Isabel, Laurinda Barreto, yang berkata padanya bahwa ia mendengar suara tembakan dan meminta bantuannya untuk melihat apa yang telah terjadi. Saksimata itu kemudian mendekati seorang prajurit di depan hotel dan dikawal memasuki pelabuhan. Ketika ia masuk ke areal pelabuhan, dilihatnya “puluhan” mayat di dekat pintu masuk barat, termasuk mayat dua atau tiga orang perempuan, yang di antaranya adalah Isabel Lobato. Ia ditembak di bagian punggung.¹³⁰

Tabel 7: Korban pembunuhan atau yang terakhir terlihat dipelabuhan pada 8 Desember 1975, yang teridentifikasi dan dilaporkan kepada Komisi

| Nama | Pekerjaan | Data Diri | Pelanggaran |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 1. Isabel Lobato | Ibu rumahtangga | Istri Nicolau Lobato | Dibunuh |
| 2. Rosa Muki Bonaparte | Anggota CCF | - | Dibunuh |

* Wawancara CAVR dengan Frederico dos Santos Almeida, Dili, 29 Agustus 2003. Perlu dicatat bahwa CAVR mendapat informasi yang bertentangan tentang siapa yang memberitahu pasukan Indonesia mengenai Isabel Lobato kepada pasukan Indonesia.

† Wawancara CAVR dengan saksi tanpa nama [A3], 13 Agustus 2004, Dili, yang menuturkan kepada Komisi: “Dan mereka membawa istri tuan Lobato ke pelabuhan. Saya melihat ia dikawal ke pelabuhan. Tetapi ketika itu saya kira mereka akan menanyakan tentang keberadaan suaminya.” Pada 1984 saudari Isabel, Laura Barreto, menuturkan kepada Amnesty International bahwa A, informan yang bekerja untuk Komisi, yang mengawal Isabel ke pelabuhan. Lihat wawancara Amnesty International “Wawancara dengan Laura Barreto – 4 Juli 1984, Lisabon” (mimeograf, 3 lembar).

| | | | |
|--|----------------|-----------------|---------|
| 3. Bernardino Bonaparte | Anggota CCF | - | Dibunuh |
| 4. Francisco Borja da Costa | Anggota CCF | - | Dibunuh |
| 5. Bimba da Silva | Anggota Unetim | - | Hilang |
| 6. Roger East* | Wartawan | Orang Australia | Hilang |
| 7. Silvinia [Bimba] Epifania M. da Silva | Anggota Unetim | - | Hilang |

149. Setelah Isabel Lobato, Rosa Muki Bonaparte dan Francisco Borja da Costa dikawal memasuki pelabuhan, di mana terjadi sejumlah gerakan penting:

- Beberapa informan menuturkan kepada Komisi bahwa beberapa lama setelah pukul 09.00, mereka dibawa dari pelabuhan ke Kampung Alor. Di sana mereka bertemu dengan seorang “komandan” tentara Indonesia.¹³¹
- Suatu waktu di pagi hari 8 Desember, Mayor Jenderal Benny Moerdani tiba di lapangan udara Dili dengan menggunakan pesawat Twin Otter, kemudian melanjutkan dengan kendaraan amfibi BTR-50 untuk berkeliling memeriksa situasi Dili.¹³² Ia bertemu dengan Kolonel Dading Kalbuadi, Kolonel Sinaga, dan Kolonel Angkatan Laut, R. Kasenda di dekat kantor gubernur.
- Beberapa saat setelah pukul 10.00, Herminio da Costa da Silva menemani Benny Moerdani berkeliling Dili. Mereka pergi ke Toko Lay. Di sana, mereka bertemu seorang perempuan etnis Cina yang mengatakan bahwa suaminya telah dibunuh oleh tentara Indonesia.¹³³
- Saksimata lainnya menuturkan kepada Komisi bahwa sekitar pukul 10.00 ia dan beberapa teman pro-Apodeti secara sukarela bergabung dengan tentara Indonesia untuk berpatroli di Dili. Dia mengatakan bahwa kelompok patrolinya pergi dari pelabuhan ke kantor gubernur, lalu ke Toko Lay, ke Jalan Formosa di belakang kantor gubernur, ke gedung Assistencia, ke gedung Matadouro, dan ke Balide, sebelum kembali ke pelabuhan.¹³⁴

Eksekusi massal, menjelang sore

150. Komisi mendapat informasi dari sejumlah orang tentang eksekusi massal di dermaga Dili pada 8 Desember. Alexandrino do Rêgo, yang ketika itu bekerja sebagai perawat militer di Rumah sakit Lahane, memberikan informasi yang terperinci kepada Komisi tentang kejadian-kejadian menjelang sore hari di pelabuhan pada 8 Desember. Dia berkata bahwa ia tiba di Colmera sekitar pukul 12.30 dan

* CAVR belum mendapat informasi dari tangan pertama mengenai kematian Roger East. Untuk informasi tentang kematian East lihat James Dunn, *Timor*, hal. 286-289.

tidak melihat ada mayat di daerah tersebut. Dua prajurit Kopassandha kemudian mengawalnya ke pelabuhan. Di tengah jalan, ia secara tak sengaja mendengar prajurit Kopassandha lain bertanya pada seorang warga Timor-Leste di mana para komunis berada. Ia melihat orang Timor itu menunjuk rumah toko milik orang Cina yang ada di seberang jalan.

151. Alexandrino do Rêgo menuturkan kepada Komisi bahwa ia dan dua prajurit Kopassandha tersebut tiba di taman yang terletak di depan pelabuhan, “Lalu saya melihat sekelompok orang Cina disuruh membersihkan halaman berumput di depan pelabuhan untuk dijadikan kuburan.” Ia menjelaskan bahwa setelah memasuki pelabuhan:

Saya disuruh berdiri dulu dan bersandar di tembok untuk melihat ABRI/TNI membunuh orang-orang di atas pelabuhan. Saya berdiri bersandar di tembok dan menghadap ke laut sambil melihat ABRI membunuh orang-orang dan membuang [mayat mereka] ke laut... Mereka disuruh berbaris baru ditembak secara serentak. Setelah satu kelompok habis, baru majukan lagi satu kelompok. Satu kelompok berjumlah sekitar 20 orang.¹³⁵

152. Alexandrino do Rêgo menjelaskan bahwa ia kemudian dikawal ke bawah dermaga untuk bertemu dengan seorang dokter Indonesia yang berada di perahu karet.

Setelah saya melihat dua kelompok orang dibunuh, saya langsung diangkat ke bawah jembatan dermaga untuk bertemu dokter. Dokter Hadi Santoso, berpangkat letnan kolonel. Saya diantar oleh kedua anggota ke bawah. Itu gelap dan mereka menggunakan lilin. Dan mereka berada di atas perahu karet—dokter bersama empat anggota Peleton Tanggo...Saya masuk sampai ke dalam kapal karet dan langsung disuruh berbicara sama dokter. Lalu saya sampaikan bahwa saya anggota rumah sakit militer. Saya langsung disambut baik oleh dokter dan [dia] memberi tugas kepada saya...[Saya] masih mendengar tembakan dan masih ada orang yang jatuh ke laut.¹³⁶

153. Menurut Alexandrino do Rêgo, dua kelompok korban yang ia lihat ditembak di atas dermaga adalah orang Timor asli, bukan etnis Cina. Alexandrino do Rêgo menuturkan kepada Komisi bahwa setelah berbicara dengan Dr. Santoso, ia kembali ke rumah sakit militer Lahane.

154. Keterangan Alexandrino do Rêgo tentang beberapa kelompok yang dieksekusi didukung oleh kesaksian Alberto de Oliveira Camara, yang menuturkan kepada Komisi bahwa dari Gereja Motael, yang terletak sekitar 300 meter dari pelabuhan, dia dapat melihat beberapa kelompok besar dieksekusi di dermaga Dili.

Setelah kami mendengar letusan senjata, barulah kami keluar [dari gereja] dan melihat orang berbaris dan ditembak...Mereka ditembak secara serentak, karena militer berbaris di tembok dan mereka [para

korban] disuruh berdiri di atas dermaga...Kurang lebih 25-30 orang sekali ditembak...Mereka berbaris sekali atau satu kelompok—25 – 30 orang sekali. Karena waktu kami melihat itu mungkin sudah satu atau dua kelompok ditembak. Kemudian diatur lagi—barisan ketiga dan keempat.¹³⁷

155. Karena jarak yang cukup jauh, Alberto Camara tidak dapat memastikan apakah korban penembakan itu warga asli Timor-Leste atau etnis Cina.

156. Komisi tidak dapat mengidentifikasi satu orang pun dari kelompok yang dieksekusi di tepi dermaga itu. Tetapi, Komisi mendapat informasi bahwa pada 9 Desember terlihat sejumlah mayat di sepanjang pantai dan di laut di sebelah timur pelabuhan, dan yakin bahwa sebagian mayat ini kemungkinan adalah orang-orang yang dibunuh di dermaga pada siang 8 Desember.*

Penghilangan kelompok pekerja etnis Cina, menjelang petang pada 8 Desember

157. Pada 8 Desember pagi, sekelompok orang yang terdiri atas 16 orang lelaki etnis Cina (yang telah ditahan di kantor beacukai sejak malam sebelumnya) diperintahkan oleh tentara Indonesia untuk menggali lubang kuburan yang besar di taman, di depan pelabuhan. Alexandrino do Rêgo menuturkan kepada Komisi bahwa ia tiba di pelabuhan sekitar pukul 13.00 melihat para lelaki itu sedang bekerja di taman. Setelah bertemu dengan dokter militer Indonesia, Hadi Santoso, Alexandrino do Rêgo disuruh kembali ke Lahane. Ia mencapai Lahane sekitar pukul 14.30. Di sana ia bertemu dengan keluarganya dan kemudian meninggalkan Lahane sekitar pukul 15.00 bersama beberapa teman dengan menggunakan dua kendaraan. Mereka sampai di pelabuhan sekitar pukul 15.30. Ketika tiba di sana, ia melihat sekelompok laki-laki etnis Cina itu masih tetap menggali di taman.

Saya sudah tidak lihat mayat lagi. Saya tidak lihat orang di situ [di pelabuhan]. Hanya ada orang Cina yang ada di luar sana [di taman]. [Mereka] masih ada di depan pelabuhan itu gali-gali lubang. Masih orang-orang yang sama.¹³⁸

158. Saksi lainnya menuturkan kepada Komisi bahwa pada 8 Desember ia berada di taman, di depan Hotel Timor sejak pagi hingga menjelang petang. Sekitar pukul 16.00, anggota militer Indonesia menyuruhnya memimpin 127 orang etnis Cina ke Kampung Alor.

[ABRI] suruh kita semua orang Tionghoa jalan ke Kampung Alor. Kita berangkat dari Hotel Timor, baru [saya] lihat beberapa orang kubur tentara [Indonesia]. Kira-kira sepuluh orang.¹³⁹

* Pernyataan HRVD 3742. Deponen menyatakan bahwa pada 9 Desember ia melihat mayat Isabel Lo-bato dan Rosa Bonaparte di Pantai Dili. Lihat juga Dunn, *Timor*, hal. 288.

159. Setelah itu, beberapa orang dari kelompok etnis Cina yang bekerja di taman menghilang. Komisi yakin bahwa mereka dieksekusi di dalam area pelabuhan. Saksi yang disuruh memimpin 127 orang Cina ke Kampung Alor menuturkan kepada Komisi bahwa ia mendengar delapan orang telah dibunuh dan dua dibebaskan. Dalam kesaksian kepada Komisi, salah seorang yang selamat dari pembunuhan itu, yang kini tinggal di Melbourne, Australia, mengatakan:

Paman saya Lay Pin Leong, sepupu Lai Siu Xian, dan ipar laki-laki Leong Yun Fa dibawa dan kami tidak pernah melihat mereka lagi. Kemudian saya diberitahu bahwa mereka telah dibunuh. Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan mayat-mayat itu dan apakah mereka dilemparkan ke laut atau tidak. Seorang prajurit merangkul bahu saya—saya kira untuk membawa saya ke tempat mereka membunuh orang-orang. Saya bicara kepadanya dengan bahasa Indonesia dan memberitahunya bahwa saya dari Kupang dan bahwa saya ingin kembali ke Kupang suatu hari nanti. Prajurit itu berkata “Kamu salah satu dari kami” dan membiarkan kami pergi. Saudara laki-laki saya juga berbicara dalam bahasa Indonesia dengan prajurit itu dan dibiarkan pergi.¹⁴⁰

160. Komisi menetapkan bahwa para anggota kelompok etnis Cina yang bekerja di taman itu telah hilang dan diduga telah dieksekusi di area pelabuhan pada 8 Desember petang.

Tabel 8: Etnis Cina yang menghilang dan diduga telah dieksekusi di pelabuhan, 8 Desember 1975, yang dilaporkan kepada Komisi

| Nama | Pekerjaan | Data Diri | Pelanggaran |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| 1. Lay Pin Leong | Pengusaha | Tinggal di Remexio | Hilang |
| 2. Lay Siu Xian (Assio) | - | 19 tahun, anak Lay Pin Leong | Hilang |
| 3. Lay Siu Chang | - | 30 tahun, anak Lay Pin Leong | Hilang |
| 4. Lay Su Chean | - | Dari Aileu, 25 tahun | Hilang |
| 5. Chung Tjeo Ching | - | 40-an tahun, dari Liquiça | Hilang |
| 6. Lay Mi Fon | Sopir | 40-an tahun | Hilang |
| 7. Lay Kian Pau | Siswa sekolah | 17 tahun, anak Lay Mi Fon | Hilang |
| 8. Leung Yung Fa (A Fa Qi)? | - | 19 tahun | Hilang |

| | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------|--------|
| 9. Lay Su Po | Penjaga toko | Dari Aileu, 18 tahun | Hilang |
| 10. Lay To Su | - | Dari Suai | Hilang |
| 11. Lay Tin Chang | Penjaga toko | 22 tahun, dari Bobonaro | Hilang |
| 12. Yong Tsoi Sin | - | - | Hilang |
| 13. Lay Tso In | Siswa sekolah | 17 tahun | Hilang |

161. Dari 16 orang dalam kelompok etnis Cina yang bekerja di taman itu, Komisi telah berhasil mengidentifikasi tiga orang yang selamat. Komisi tidak dapat menentukan nasib ke-127 anggota etnis Cina Timor yang ditahan di Kampung Alor.

Eksekusi di Ailok Laran, 8 Desember 1975

162. Komisi mendapat informasi tentang pembunuhan di luar hukum di sepanjang Sungai Maloa di daerah Ailok Laran, sekitar satu kilometer di baratdaya gedung Matadouro. Iria de Araújo, yang ketika itu berusia 25 tahun, menuturkan kepada Komisi bahwa pada 8 Desember petang, pamannya, Daniel de Araújo, muncul dari arah gedung Assistencia. Dia terluka. Menurut Iria, pamannya menuturkan kepada keluarganya bahwa mereka harus mundur ke selatan, tetapi ayah Iria, Alfredo de Araújo, tidak setuju dan mereka tetap tinggal di rumah. Iria de Araújo menuturkan kepada Komisi bahwa pada 8 Desember itu tentara Indonesia membunuh sekelompok orang di Sungai Maloa:

Sekitar jam 5.30, mereka [ABRI] masuk sebelah sungai [Maloa] itu. Lalu kami berdiri dan langsung menghadap mereka. Menyerah begitu saja, kami menyerahkan diri kepada mereka...Kami menghadap mereka dan mereka langsung membagi kami—membagi para laki-laki sendiri dan kami perempuan dan anak sendiri. Setelah membagi, para laki-laki digiring ke atas, kami perempuan didorong ke bawah, jalan menuju ke Matadouro. Kemudian kami sampai di sungai di depan rumah Senhor Tomãs Ximenes. Di sekitar itu, sampai di sana, saya melihat kembali ke belakang. ABRI mulai mengumpulkan mereka [laki-laki].¹⁴¹

163. Karena curiga, para prajurit Indonesia kemudian menarik saudara laki-laki Iria Araújo keluar dari kelompok itu dan bertanya kepadanya.

Sementara kakak saya bernama Antonio, yang sekolah Quinto Ano [tahun kelima], ditarik dari kelompok laki-laki. Saya jauh, tetapi saya melihat dengan jelas ketika mereka menarik kakak saya dan memisahkannya dari kelompok.¹⁴²

164. Iria de Araújo menjelaskan bahwa para tentara berbicara kepada Antonio, kemudian membunuhnya. Setelah itu tentara menembaki kelompok laki-laki tersebut dan membunuh semuanya. Iria menjelaskan:

Kemudian [ABRI] mengelilingi mereka, lalu diikuti dengan tembakan secara berentetan kepada para laki-laki itu. Itu saya melihat dengan mata saya sendiri. Saya melihat dengan mata bahwa [pasukan] Indonesia memang menembak mereka.¹⁴³

165. Komisi menemukan bahwa 17 orang terbunuh dan hanya satu selamat.^{*} Sebagian besar korban berasal dari Ainaro, dan banyak dari mereka merupakan pengikut partai monarkis KOTA.

Tabel 9: Korban yang berhasil diidentifikasi dari kejadian 8 Desember 1975 di Ailok Laran, yang dilaporkan kepada Komisi[†]

| Nama | Pekerjaan | Data Diri | Pelanggaran |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 1. Antonio de Araújo | Mantan Tropas | 26 tahun | Dibunuh |
| 2. Pedro de Araújo | - | ~33 tahun | Dibunuh |
| 3. Francisco Xavier Araújo | - | 38 tahun, ayah #4 | Dibunuh |
| 4. Abilio Israel Xavier Sousa | - | 17 tahun, anak #3 | Dibunuh |
| 5. Salustiano de Araújo | - | 40 tahun, saudara #3? | Dibunuh |
| 6. Albino Sousa da Silva | - | 15 tahun, anak #5 | Dibunuh |
| 7. José Mendes | - | 42 tahun, saudara #3 | Dibunuh |
| 8. Alcino de Araújo Sousa | - | 26 tahun | Dibunuh |
| 9. Alexandre de A. Carvalho | Mantan Tropas | ~26-28 tahun | Dibunuh |
| 10. Marçal de Araújo Carvalho | - | 23 tahun, dari Ainaro | Dibunuh |

^{*} Selain dari kesaksian Iria de Araújo, daftar korban ini juga berdasarkan pada sebuah daftar berbahasa Portugis yang berjudul "Nome de alguns massacrados pelos soldados indonésios n Zona da Maloa, Ail Loc Laran e Bairro do Matadouro, Dili nos primeiros dias (8-12-1975) do ataque indonésio a Dili," Submissi ke CAVR, Anthony Goldstone.

[†] Salah satu yang juga mungkin menjadi korban adalah Afonso de Araújo, usia 39 tahun.

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------|---------|
| 11. Antero da Conceição | - | 22 tahun, dari Ainaro | Dibunuh |
| 12. Adelino de Araújo | - | ~29 tahun, dari Ainaro | Dibunuh |
| 13. Luciano de Araújo | - | - | Dibunuh |
| 14. Antonio dos Reis | - | - | Dibunuh |
| 15. Vasco da Silva | - | 56 tahun | Dibunuh |
| 16. Vidal de Araújo | - | 31 tahun | Dibunuh |
| 17. Tomás Xavier | - | - | Dibunuh |
| 18. Honório | - | - | Cedera |

166. Francisco Soriano mengatakan kepada Komisi bahwa pada 9 Desember tentara Indonesia datang ke Manumeta Raihun dan meminta beberapa laki-laki untuk membantu menguburkan mayat-mayat. Walaupun ia sendiri tidak menguburkan mayat, pamannya ada dalam kelompok yang datang ke Sungai Maloa untuk mengubur 12 orang dari Ainaro.¹⁴⁴

167. Komisi telah menerima informasi tentang kejadian kedua di lokasi yang sama pada malam 8 Desember 1975. Menurut Iria de Araújo, pada 8 Desember malam ayah dan pamannya pergi ke sungai untuk melihat mayat-mayat. Tentara Indonesia menembakkan senjata dan salah satunya mengenai dan membunuh Juvençio de Araújo, sepupu Iria yang berusia 2-3 tahun, yang ketika itu berada dalam pelukan ibunya, jaraknya jauh dari orang itu.¹⁴⁵

Eksekusi perorangan dan mayat-mayat yang ditemukan di Dili

168. Selain dari kasus-kasus besar yang melibatkan pembunuhan massal dan eksekusi sebagaimana dibahas di atas, Komisi juga mendapat informasi tentang sejumlah pembunuhan dan mayat-mayat yang ditemukan di Dili selama hari-hari pertama invasi. Kurang dari separuh jumlah korban berhasil diidentifikasi berdasarkan nama. Tabel di bawah ini menunjukkan lokasi terbunuhnya orang-orang itu atau tempat mayat mereka terlihat.

Tabel 10: Warga sipil yang dibunuh dan mayatnya ditemukan di Dili, 7 - 10 Desember 1975, yang dilaporkan kepada Komisi

| Lokasi | 7 Desember | | 8 Desember | | 9 Desember | | 10 Desember | |
|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|-------------|----------|
| | Dibunuh | Mayat | Dibunuh | Mayat | Dibunuh | Mayat | Dibunuh | Mayat |
| Becora | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Bidau Lecidere | 2 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - |
| Bairro dos Grilhos | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bairro Formosa | - | 5-6 | - | - | - | - | - | - |
| Audian | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Museum/muka air | - | - | - | 6-8 | - | 4 | - | - |
| Caicoli | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Villa Verde | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lahane | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ponte Caise/ Pelabuhan | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Mandarin | - | 5-6 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| Motael | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Palapaço | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bairro Pite | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Sungai Maloa | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Fatumetan | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kampung Alor | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lokasi tak diketahui | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | 14-15 | 8-9 | - | 15-17 | - | 11 | 4 | - |

169. Dari 52 sampai 56 orang ini, 48 sampai 50 adalah laki-laki, enam perempuan, dan 11 – 12 adalah etnis Cina. Jika digabungkan dengan kejadian-kejadian utama yang telah dibahas di bagian sebelumnya, Komisi dapat memberikan rangkuman berikut ini tentang kematian/eksekusi warga sipil antara 7 sampai 10 Desember 1975, yang dilaporkan kepada Komisi.

Tabel 11: Total jumlah warga sipil yang dibunuh atau dieksekusi, dari 7 - 10 Desember 1975, seperti dilaporkan kepada Komisi

| Lokasi | Warga Timor | Cina | Australia | Total |
|-----------------------|----------------|----------|-----------|----------------|
| Colmera | | | | |
| Samping Toko Lay | - | 1 | - | 1 |
| Kasus-kasus tunggal | - | 5 | - | 5 |
| Rumah Li Nheu Ki | - | 8-9 | - | 8-9 |
| Gedung Assistencia | 23-60 | - | - | 23-60 |
| Matadouro | 8-11 | - | - | 8-11 |
| Sungai Maloa | 8 | - | - | 8 |
| Pelabuhan | | | | |
| Pagi hari | 6-15 | - | 1 | 7-16 |
| Eksekusi massal | 60-75 | - | - | 60-75 |
| Kelompok pekerja Cina | - | 13 | - | 13 |
| Ailok Laran | 18 | - | - | 18 |
| Kasus lainnya | 41-44 | 11-12 | - | 52-56 |
| Total | 164-231 | 3 | 1 | 203-272 |

170. Komisi juga menerima informasi tentang beberapa penduduk sipil yang dilaporkan terluka selama invasi. Selain mereka yang terluka di gedung Assistencia dan seorang yang mengalami cedera saat terjadi eksekusi massal di Ailok Laran, ada pula seorang bocah lelaki warga keturunan Cina berumur sembilan tahun yang terlihat berada di sisi kantor gubernur dan juga seorang lelaki bernama Orlando Costa.¹⁴⁶

171. Akhirnya, Komisi juga menerima informasi mengenai sejumlah orang yang dilaporkan hilang selama periode ini, namun sulit menentukan apakah mereka terbunuh di Dili atau melarikan diri ke gunung.

Pembunuhan di luar hukum oleh Fretilin setelah invasi Indonesia (Desember 1975 dan Februari 1976)

172. Pada hari militer Indonesia melancarkan invasi besar-besarnya pada dini hari 7 Desember 1975, banyak pemimpin senior Fretilin di Dili dievakuasi ke Aileu. Para pemimpin Fretilin ini juga membawa serta para tahanan Fretilin yang sebelumnya telah ditahan di Quartel Geral di Taibessi (Dili). Pada hari yang sama, sekitar 100 atau lebih tahanan yang telah ditahan Fretilin di Comarca Balide diizinkan berjalan

keluar dari penjara; banyak di antara mereka yang kemudian bekerjasama dengan kekuatan invasi Indonesia (lihat Bab 7.4: Penahanan Sewenang-wenang, Penyiksaan, dan Penganiayaan). Di Aileu, sekitar 900 tahanan yang dibawa dari Dili bergabung dengan tahanan yang telah ada sehingga jumlahnya bervariasi antara 1.000 dan 3.000.* Komisi juga menerima bukti bahwa beberapa ratus tahanan ini dibunuh di Aileu, Maubisse (Ainaro), dan di wilayah Same (Manufahi) pada Desember 1975 dan Januari 1976 ketika Fretilin/Falintil menyingkir akibat majunya pasukan Indonesia. Komisi juga mendapat laporan bahwa beberapa pemimpin senior Fretilin secara langsung terlibat dalam pembunuhan tersebut. Komisi juga menerima kesaksian perorangan tentang eksekusi yang terjadi di distrik lain pada saat itu, termasuk Manatuto, Ainaro, Ermera, dan Lautém, tetapi tidak bisa menginvestigasi lebih jauh laporan-laporan tersebut.

Pembunuhan di Aileu, Desember 1976

173. Komisi menerima kesaksian tentang pembunuhan massal yang terjadi pada Desember 1975 di beberapa tempat eksekusi dekat gudang di Aissirimou, tempat Fretilin menahan kebanyakan tahananannya. Para saksi memberikan kesaksian tentang pembunuhan di Saboria dan Aituni, sekitar 3 km dari penjara, dan dua lokasi di Aissirimou, sekitar 2 km dari penjara. Komisi juga menerima informasi tentang dua lokasi lainnya, satu di Aissirimou dan di kuburan Cina; di mana dilaporkan bahwa para tahanan dibunuh di tempat tersebut.

174. Dari keterangan umum yang diterima dari para mantan tahanan Aileu, yang menggambarkan eksekusi secara rutin setiap malam, tampaknya eksekusi tidak terjadi pada kejadian-kejadian yang dilaporkan kepada Komisi.

175. Salah seorang saksi, Miguel Fatima Soares, mengatakan kepada Komisi bahwa jika Humberto Martins da Cruz yang bertanggung jawab melaksanakan kerja sehari-hari di penjara dan menjalankan eksekusi datang ke gudang tempat para tahanan ditawan secarik kertas di tangannya, itu berarti dia akan memanggil nama-nama tahanan untuk dibawa keluar tanpa pernah kembali. Dua tahanan lain, Alexander da Costa Araújo dan Serafin do Nascimento menggambarkan bagaimana mereka melihat para tahanan secara rutin diangkut dengan truk dengan tangan terikat ke belakang biasanya pada larut malam. Mereka dibawa ke suatu tempat dengan lubang galian dan diperintahkan berdoa. Saksi lain mengatakan kepada Komisi bahwa pada siang hari para tahanan secara rutin diperintahkan menggali lubang di belakang gereja Aileu.¹⁴⁷

176. Alexandre da Costa Araújo, dalam kesaksiannya pada audiensi publik Komisi mengenai pembunuhan massal, menggambarkan pembunuhan 10 tahanan di Saboria pada Desember 1975 yang dilakukan oleh Humberto Martins da Cruz:

* Mengenai jumlah tahanan yang dibawa dari Dili, lihat wawancara CAVR dengan Assis dos Santos [transkrip tanpa tanggal]: Sedangkan jumlah tahanan di Aileu setelah evakuasi tahanan dari Dili, lihat wawancara CAVR dengan Humberto Martins da Cruz, Dili [tanpa tanggal].

Saya dan saudara lelaki saya, Afonso Araújo, ketika itu adalah anggota UDT. Di saat terjadinya kudeta, saya tinggal di Desa Saboria dan tidak tahu-menahu tentang kudeta itu. Ketika terjadi kontra-kudeta oleh Fretilin, saya ditangkap dan dibawa ke Aissirimou [Aileu], di mana bersama ratusan tahanan lainnya dari berbagai wilayah, saya dipaksa untuk bekerja di kebun komunal Fretilin. Setelah beberapa lama, saya secara resmi dibebaskan dari penjara tersebut. Tetapi selama beberapa minggu setelah itu, saya masih harus membawa kayu bakar ke Aissirimou setiap sore dan masih belum diperbolehkan tidur di rumah saya sendiri di Saboria. Setelah beberapa minggu melakukan ini, akhirnya saya diizinkan untuk tidur di rumah.

Pada jam sebelas pada suatu malam, ketika saya sedang tidur di rumah, saya mendengar suara sebuah mobil yang disusul dengan suara seseorang mengetuk pintu rumah saya. Saya merasa cemas dan takut. Kemudian saya membuka pintu dan melihat kepala penjara, Humberto, berdiri di sana. Saya mengajak dia masuk, tapi dia hanya menyuruh saya pergi bersamanya. Pada saat itu, saya menyadari bahwa dia sedang mabuk, tetapi saya terpaksa menuruti apa yang dia katakan. Dia membawa saya ke suatu tempat, di mana sebuah truk diparkir dengan ada orang-orang di bak belakangnya. Ada sepuluh orang di bak belakang, tetapi saya hanya kenal dua di antaranya, antara lain Maubale dari [desa] Seloi.

Dia memerintahkan para anak buahnya untuk membawa turun orang-orang itu dari truk. Kemudian, dia membariskan para tahanan itu, memberi mereka waktu untuk berdoa, dan melepaskan satu tembakan. Begitu dia melepaskan tembakan itu, para anak buahnya pun memberondongkan senjata G3 mereka ke arah para tahanan tersebut. Mereka hanya berada pada jarak sepuluh meter dan mati seketika. Kemudian Humberto menyuruh saya memanggil orang-orang di daerah itu untuk datang dan menguburkan mayat-mayat tersebut.¹⁴⁸

177. Dalam kesaksiannya kepada Komisi, Humberto Martins da Cruz, kepala penjara di Aissirimou yang memimpin tim eksekusi memberikan keterangan yang sama tentang apa yang dikatakan tentang eksekusi massal terpisah yang terjadi pada satu malam pada Desember 1975. Para korban berkisar antara 23 sampai 26 tahanan, termasuk mantan kepala polisi Portugis, Kolonel Rui Magiolo Gouveia, yang berpihak pada UDT setelah Aksi Bersenjata UDT. Keterangan lengkap tentang eksekusi—dari diambilnya para tahanan pada sekitar pukul 23.00 sampai ke tempat eksekusi, tempat lubang yang akan menjadi kuburan bersama telah digali, sampai Humberto Martins memberi isyarat dengan pistolnya kepada pasukan untuk menembak—cocok dengan kesaksian lain yang menggambarkan bahwa eksekusi terjadi secara rutin.

178. Menurut Humberto Martins da Cruz, keputusan untuk mengeksekusi para tahanan diambil ketika makan malam oleh enam pemimpin Fretilin, termasuk para anggota Komite Sentral, pemimpin Fretilin setempat, dan Komandan Falintil di Aileu.* Humberto Martins da Cruz mengingat:

Pada jam sebelas malam mereka memanggil saya dari rumah saya... Mereka mendatangi rumah saya dalam perjalanan ke tempat para tahanan ditahan, karena kami akan membawa keluar mereka untuk dibunuh di Aissirimou...Seperti telah disepakati pada saat makan malam pada malam sebelumnya bahwa para tahanan akan dibunuh... Saya melaksanakan perintah dan mengikuti mereka ke Aissirimou, ke tempat para tahanan akan dieksekusi.

Ketika tiba, saya melihat antara 23 dan 26 tahanan berdiri di seberang sana, di sebuah lapangan yang telah disiapkan untuk mereka. Para tahanan diikat. Lapangan tersebut telah disiapkan pada siang, sebelum mereka dieksekusi. Sebelum mereka dieksekusi saya berkata kepada mereka bahwa inilah saatnya, jadi siapa pun yang ingin melarikan diri, silakan. Salah seorang dari menjawab saya...kami datang ke sini untuk mati, bukan untuk hidup.¹⁴⁹

179. Humberto Martins da Cruz kemudian berkata bahwa dia memberi isyarat kepada pasukan pembunuh untuk menembak, dengan cara menembak ke arah para tahanan. Pasukan pembunuh kemudian menembak dengan senjata G-3 dan melempar granat.

180. Alexandre da Costa Araújo memberikan kesaksian tentang pembunuhan massal lain terhadap para tahanan di sebuah lokasi yang disebut Manifunihun di Aissirimou.

Pada suatu malam, entah berita dari siapa, penduduk di Desa Saboria panik. Mereka mendengar bahwa tahanan yang berjumlah lebih dari sekitar 100 orang sedang diangkut dari penjara Aileu ke Manifunihun, Aissirimou. Menantu saya, Felisberto dos Santos, juga dibawa ke sana karena Fretilin menangkapnya di Soibada. Mendengar berita itu, saya bersama beberapa orang di Desa Saboria segera bergegas secara sembunyi-sembunyi menuju ke Aissirimou. Lokasi Aissirimou terletak di atas sebuah sungai dari arah Saboria sehingga dengan hati-hati kami masuk ke sungai, lalu naik ke lokasi di mana para tahanan itu telah dikumpulkan. Kami berhenti pada sebuah tempat di mana kami

* Humberto Martins mengatakan bahwa orang-orang berikut ini mengambil keputusan untuk membunuh para tahanan: José da Silva (Komandan Kompi Aileu dan wakil Kepala Staf Falintil), Adão Mendonça (Sekretaris Komite Regional Fretilin Aileu), Alarico Fernandes (anggota Komite Sentral Fretilin), Sebastião Sarmiento (anggota Komite Sentral Fretilin), Luis Castro, Pedro Aquino, dan Gildo Ribeiro. Sumber lainnya secara penuh atau separuh memastikan kepada Komisi bahwa orang-orang tersebut secara penuh bertanggung jawab atas pengambilan keputusan untuk membunuh para tahanan (lihat, misalnya, Wawancara CAVR dengan Adelino Gomes, Dili, 11 Juni 2003; José Catarino Gregório Magno Trindade de Melo [Labut Melo], 23 Juli 2004, dan Herminio da Silva da Costa, Jakarta, 9 Agustus 2004).

bisa melihat para tahanan dan beberapa mobil yang terparkir dari kejauhan. Beberapa lama kemudian mulai terdengar suara tembakan. Tembakan itu berlangsung sekitar 15 menit. Kami hanya mendengar suara orang berteriak dan tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Setelah bunyi tembakan berhenti, kami kembali ke Saboria. Hingga kini, tidak seorang pun mengetahui dengan jelas berapa banyak orang mati dalam pembantaian itu. Ada yang mengatakan jumlahnya 160, ada juga yang mengatakan 90.¹⁵⁰

181. Sekitar 150 tahanan dipindahkan ke Maubisse pada 8 Desember dan ditempatkan di sebuah gudang. Salah seorang tahanan yakin bahwa mereka telah dibawa ke sana untuk dibunuh tetapi akhirnya selamat karena pasukan Fretilin/Falintil di Maubisse secara tegas menolak rencana tersebut. Namun dua kelompok tahanan; yaitu satu kelompok terdiri atas para pemimpin UDT yang kebanyakan *mestiço* (peranakan) dan kelompok lainnya terdiri atas antara 30 dan 40 orang pemimpin Apodeti, telah dibawa kembali ke Aileu dalam kesempatan terpisah dan dibunuh di sana. Salah seorang anggota Komite Sentral Fretilin, Helio Pina (Mau Kruma), yang ketika itu berada di Aileu, dilaporkan hadir pada saat pembunuhan yang dilaksanakan di bawah pimpinan Humberto Martins da Cruz dan asistennya, Pedro Aquino.

Pembunuhan di luar hukum terhadap para tahanan oleh Fretilin di Maubisse (Ainaro)

182. Satu kelompok yang terdiri atas 300 – 400 tahanan dievakuasi dari Aileu pada 27 Desember 1975, ketika pasukan Indonesia mendekati kota tersebut. Para tahanan disuruh membawa kotak-kotak amunisi dan beberapa di antara mereka, lemah karena lapar dan penganiayaan, dilaporkan meninggal selama perjalanan. Kelompok ini tiba di Maubisse sehari kemudian, yaitu 28 Desember 1975. João da Costa, seorang pendukung UDT dari Same; yang telah dipindahkan ke Aileu bersama tahanan lain pada September, menyampaikan kesaksiannya kepada Komisi mengenai pembunuhan satu kelompok tahanan di Maubisse; pada malam 28 Desember 1975. Kelompok ini juga termasuk Major Lorenço, seorang pemimpin UDT dari Same, Amadio Coelho, manajer Pousada di Maubisse, Celestino dan Manuel Belo dari Baucau, Jacques Pan; dan seorang lelaki Cina yang tidak teridentifikasi. Mereka diambil dan dieksekusi di persimpangan jalan ke Turiscaí.¹⁵¹

183. Kelompok tahanan lain yang telah dibawa ke Maubisse juga dikembalikan ke Aileu pada sekitar waktu yang sama dan kemudian dibunuh di sana. Salah seorang anggota kelompok yakin bahwa mereka diselamatkan karena campurtangan Nicolau Lobato:

[Di sebuah jembatan yang disebut Fatubosa], kira-kira satu kilometer dari Aileu...[ada] banyak orang dan tentara di sana, polisi militer dari timur...Mereka berkata: "Apa yang akan kamu lakukan terhadap mereka?"...Mereka adalah saudara kita. Mengapa kamu harus membunuh [mereka]?"...orang yang bertugas...berkata: "Anda

sekalian...Saya terima surat dari Wakil Presiden Fretilin, Nicolau Lobato, yang meminta agar kendaraan ini kembali [ke Maubisse]... Apa yang terjadi adalah ketika kami dalam perjalanan [ke Aileu], di persimpangan Maubisse-Turiscari, Nicolau Lobato dan Eduardo dos Anjos berada di sana dengan teropong sedang mengawasi pesawat [Indonesia] mengebom Aileu. Dia melihat kendaraan yang kami tumpangi lewat... Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika kami telah berada di Fatubosa sekitar 10 atau 15 menit surat dari Wakil Presiden datang [menginstruksikan para tentara] untuk mengirim kembali kendaraan.

Pembunuhan di Same, akhir Januari 1976

184. Komisi telah menerima bukti yang menguatkan tentang rentetan pembunuhan yang terjadi di Same pada akhir Januari 1976, ketika pasukan Indonesia menguasai Desa Betano (Same, Manufahi) dan mulai bergerak menuju Same.

- Pada 27 Januari, tujuh tahanan, termasuk Sekretaris Jenderal Apodeti, José Fernando Osório Soares, dieksekusi di Hat Nipah, Holarua.
- Pada 29 Januari, 11 tahanan diambil dari tempat penahanan di gedung sekolah dasar di Same dan mereka yakin mereka akan dieksekusi. Sembilan di antaranya berhasil melarikan diri dalam perjalanan tetapi dua akhirnya dibunuh.
- Pada 29 Januari, sekitar 30 tahanan dibunuh di gedung sekolah dasar di Same.

185. Pada 29 Desember 1975 sisa tahanan yang berjumlah antara 300 dan 400 orang dievakuasi ke arah selatan dari Maubisse ke Same, bersama Pasukan Fretilin/Falintil yang mundur. Para tahanan dipaksa membawa kotak-kotak amunisi dalam perjalanan menuju Same dan tiba pada keesokan harinya. Pada 2 Januari 1976 para tahanan dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan penilaian Fretilin atas tingkat ancaman yang ada pada mereka, walaupun dalam pandangan João da Costa, salah seorang yang dimasukkan ke dalam kategori “paling berbahaya (*perigosissimo*)”, para penahan tidak cukup kenal dengan para tahanan untuk bisa membuat penilaian tersebut. Kelompok yang dikira paling berbahaya, yang mencakup Sekretaris Jenderal Apodeti, José Fernando Osório Soares, ditahan di sebuah sel bawahan di kantor administrator subdistrik (*posto*) di kota Same.¹⁵² Mereka yang dianggap kurang berbahaya ditahan di sekolah dasar kota.

186. Pada 27 Januari 1976, setelah Betano jatuh ke tangan pasukan Indonesia, semua tahanan dipindahkan ke rumah Major Lorenço di Holarua, pemimpin UDT yang telah dibunuh di Aileu satu bulan sebelumnya. Pada malam yang sama anggota Komite Sentral Fretilin César Mau Laka mendatangi rumah tersebut dan memerintahkan agar delapan orang diambil untuk diinvestigasi.¹⁵³ Kedelapan orang tersebut—José Fernando Osório Soares, Sekretaris Jenderal Apodeti, dan tujuh tahanan lainnya, Domingos Osório Soares, Arlindo Osório Soares, Mário Zores, Monis da Maia, Saidi Musa, Manuel Jacinto, dan Peter Mu (juga dikenal sebagai Peter Vong)—dibawa ke sebuah tempat bernama Hat Nipah.

187. Monis da Maia, satu-satunya orang yang selamat dari kelompok ini, menuturkan kepada Komisi:

Pada 27 Januari, ABRI memasuki Betano. Fretilin berusaha menangani situasi dan kami dipindahkan ke Holarua. Kelompok kami tinggal di rumah Major Lorenço. Pada suatu hari, setelah saya selesai berdoa di rumah itu, seseorang memanggil saya keluar. Ketika saya sampai di luar, orang yang memanggil saya itu merobek kancing baju saya hingga terlepas. Saya heran dan berkata, "Mengapa kamu merobek kemeja saya? Apa salah saya? Apakah saya akan dibunuh?" Seseorang lain di belakang saya berkata, "Tikam dia supaya dia tutup mulut."

Mereka menutup mata saya dengan kain, mendorong saya masuk ke mobil dengan orang-orang lain, dan membawa kami pergi untuk dibunuh. Ketika kami tiba di Hat Nipah, mobil berhenti. Kami diturunkan satu demi satu. Yang pertama diturunkan adalah Arlindo Osório. Arlindo berteriak agar dia jangan dibunuh dulu, tetapi mereka langsung menembaknya. Kemudian mereka menurunkan Domingos Osório dan menembak dia. Kemudian tiba giliran Sekretaris Jenderal Apodeti, José Osório Soares. Ia berkata: "Jangan bunuh kami seperti ini. Biarkan kita mati di pertempuran." Tetapi mereka menembak mati dia.

Kemudian mereka menarik Saidi Musa, Peter Vong, dan Manuel Jacinto dan menembak mereka satu demi satu. Saya keluar dari mobil dan berkata, "Biar saya berdoa dahulu." Saya berlutut, menutup mata saya, dan berserah diri kepada Tuhan. Senjata-senjata itu diarahkan kepada saya. Tembakan-tembakan dilepaskan dan saya jatuh ke tanah. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi peluru itu hanya melukai belakang kepala saya saja. Dari delapan orang yang diambil untuk dibunuh, enam orang mati di tempat. Salah seorang, Mário Zores, selamat tetapi dibunuh kemudian.¹⁵⁴

188. Monis da Maia dibiarkan sekarat. Ia merangkak mencari selamat dan berhasil mendapatkan pertolongan dari keluarganya di Same dan selamat dari luka kecil di kepalanya. Assis dos Santos adalah anggota Apodeti yang telah ditahan di Dili pada 4 Oktober 1975, kemudian dia dibawa oleh Fretilin bersama tahanan lainnya sesuai rute dari Dili ke Aileu, Maubisse, Same, dan pada akhirnya Holarua, menyaksikan kematian Mário Zores, yang selamat dari eksekusi massal pada 27 Januari. Sehari kemudian Mário Zores keluar dari tempat persembunyiannya dekat sebuah rumah di Holarua tempat para tahanan ditawan, untuk mencari makanan. Seorang laki-laki, yang melihat dia sedang makan jagung dekat sumur desa, mulai berteriak sehingga orang berdatangan dengan tombak dan pedang. Salah seorang melempar tombak yang mengenai perut Mário Zores. Ketika tombak itu tidak membunuhnya, seorang laki-laki lain menembaknya hingga mati.¹⁵⁵

189. Pada malam 28 Januari 1976, 34 tahanan dipindahkan oleh pasukan Fretilin/Falintil yang dipimpin anggota Komite Sentral Fretilin, César Mau Laka, dari Holarua ke Same dan digabungkan dengan 10 tahanan lainnya yang telah ditahan di gedung sekolah dasar. Dari kunjungannya yang secara teratur, jelaslah bagi para tahanan bahwa César Mau Laka telah diberi tanggung jawab atas mereka. Beberapa pemimpin nasional dan lokal Fretilin juga dilaporkan memainkan peranan yang menentukan atas nasib para tahanan. Mereka ini termasuk anggota Komite Sentral Fretilin, mencakup Nicolau Lobato, Lito Gusmão, Hamis Basarewan (Hata), Alarico Fernandes, dan Kanusa Bino. Sedangkan pemimpin lokal Fretilin antara lain Pedro Cortereal, Adriano Cortereal, dan Antonio Cepeda.

190. Pagi hari berikutnya, kesebelas tahanan—João Pereira, Nicolau dos Santos, José Tilman, Miguel Pereira, Mateus de Araújo, Alfonso de Araújo, José Miquita, Lebeak Lobato, Paulo Pereira, João Pereira, dan Lino Cowboy—dibawa dari gedung sekolah dasar dalam sebuah kendaraan, dengan tujuan menghadiri sebuah “pengadilan rakyat”. Berpikir mereka akan dieksekusi, ketika tali yang diikatkan pada mereka mulai longgar, mereka semuanya melompat dari kendaraan. Lino Cowboy tersandung dan langsung ditembak mati. Paulo Pereira juga dilaporkan dibunuh.¹⁵⁶

191. Kaburnya mereka membuat César Mau Laka berang. Ia bergegas ke gedung sekolah itu. João da Costa, orang yang selamat dari pembantaian berikutnya menuturkan kepada Komisi apa yang terjadi:

Yang memimpin untuk mengeksekusi para tahanan waktu itu adalah Cesar Mau Laka. Dia masuk ke dalam ruang sekolah dan berteriak: “Baris!” Kami pun berdiri semua. Dia berbicara dalam bahasa Portugis, “Teman-teman kalian itu, tadi mau dibawa untuk mengikuti proses peradilan, tapi malah melarikan diri semua untuk bergabung dengan Indonesia agar datang membunuh kita. Sekarang kalian masing-masing berdoa!” Sebelum kami selesai berdoa, mereka sudah mulai menembak. Tiga orang menembak hingga mereka kehabisan peluru. Kemudian tiga orang lainnya mulai menembak. Kemudian tiga orang lagi. Ketika mereka pergi, mereka melemparkan sebuah granat ke dalam ruangan.

Saya berada di bawah mayat-mayat. Saya angkat diri saya dan berdiri di pojok. Kakak saya merangkul saya dari belakang. Dia tidak sanggup lagi. Tangan saya ke perut kakak saya, darah sedang mengucur.¹⁵⁷

192. Sekitar 30 orang tewas dalam pembantaian ini. João da Costa memandang kakaknya mati kehabisan darah. Yang selamat hanyalah dia dan tiga orang lainnya, Filipe Antonio de Aquino Caldas, Bento dos Reis Fernandes, dan Nazario Cortereal. Mereka berhasil meloloskan diri lewat jendela.¹⁵⁸

193. Pembunuhan-pembunuhan baru berhenti ketika sekelompok komandan Falintil dari wilayah timur menentang hal tersebut.* Para komandan dan pengikut mereka bergegas menuju Holarua dari Aileu dan Viqueque, setelah mendengar bahwa Nicolau Lobato telah memerintahkan eksekusi terhadap José Osorio Soares dan pemimpin Apodeti lainnya. Para saksimata mengatakan kepada Komisi bahwa para komandan tersebut termasuk seorang sersan yang disebut Guido yang dulunya bertugas sebagai anggota Polisi Militer Portugis, Paulino Gama (Mauk Moruk), Ologari, Antonio Pinto (Kalohan), Moises Quina, Joaquim Ossu, Albino Gusmão, dan Julio Nicolau.¹⁵⁹ Menurut Sera Malik, yang ketika itu bersama para komandan ketika mereka tiba di Same, mereka berdebat bahwa salah bila Fretilin membunuh sesama orang Timor-Leste, dan perselisihan itu menjadi begitu serius sampai-sampai nyaris terjadi baku tembak.¹⁶⁰ Ketika para komandan meninggalkan Same, mereka membawaserta sekelompok tahanan yang tinggal di wilayah timur. Pada awal 1976, Komite Sentral Fretilin mengeluarkan perintah yang mencabut semua pembatasan terhadap para tahanan UDT tetapi tetap mempertahankan pembatasan tersebut untuk beberapa tahanan Apodeti.¹⁶¹ Setelah itu, beberapa tahanan berbaur dengan penduduk di dalam kontrol Fretilin; lainnya berperan aktif dalam Resistansi dan ada yang memilih untuk pindah ke wilayah yang dikuasai Indonesia. Di wilayah-wilayah yang dikontrol Fretilin, mantan anggota UDT dan Apodeti terus dicurigai dan kadang-kadang menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan (lihat di bawah).

Tingkat pertanggungjawaban

194. Pemimpin Fretilin masa lalu dan masa kini telah mengakui bahwa eksekusi massal terjadi pada Desember 1975 dan Januari 1976, dan bahwa Fretilin sebagai institusi memiliki tanggung jawab politik atas terjadinya eksekusi tersebut (Lihat kotak “Tanggung jawab Fretilin dan pembunuhan massal pada Desember 1975 dan Januari 1976”, setelah paragraf 207).† Mereka juga sepakat bahwa eksekusi para tahanan terjadi bukan karena hasil keputusan resmi Komite Sentral tetapi merupakan akibat kondisi tak terkendali yang diciptakan oleh serangan gencar Indonesia dan hilangnya kontrol Fretilin atas berbagai kejadian (lihat kutipan dari Mari Alkatiri dan Xanana Gusmão dalam kotak “Tanggung jawab Fretilin dan pembunuhan massal pada Desember 1975 dan Januari 1976”).

195. Komisi setuju bahwa pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Aileu, Maubisse, dan Same tidak mendapat dukungan resmi dari keputusan Komite

* Bukan hanya para komandan yang dilaporkan menentang eksekusi. Francisco Gonçalves mengatakan kepada Komisi bahwa Raul Isaac, seorang komandan dari Same, telah melindungi satu dari sembilan atau sepuluh tahanan yang telah melarikan diri dari truk yang membawa mereka untuk dieksekusi pada 29 Januari. Menurut Francisco Gonçalves: “Kemudian dia membawa orang tersebut langsung ke Wakil Presiden, Nicolau Lobato, dan berkata: ‘Orang ini bersama saya, saya tidak mau seorang pun menyentuhnya.’ Dia tidak menyentuh orang tersebut.”

† Lihat, misalnya kutipan dari Mari Alkatiri, salah seorang anggota Komite Sentral Fretilin sejak 1974 dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Fretilin, dalam Boks: “Tanggung jawab Fretilin dan pembunuhan massal pada Desember 1975 dan Januari 1976”, setelah paragraf 207 bab ini.

Sentral Fretilin. Namun komisi yakin bahwa bukti yang tersedia menunjukkan bahwa aksi-aksi ini mendapat dukungan tidak hanya dari para pemimpin Fretilin setempat tetapi juga beberapa anggota Komite Sentral yang berada di wilayah-wilayah tempat eksekusi berlangsung.

196. Para saksi pembunuhan yang terjadi dalam dua bulan setelah invasi Indonesia pada 7 Desember menyebut para anggota Komite Sentral Fretilin yang berada di Aileu, Maubisse, dan Same pada saat pembunuhan-pembunuhan itu. Beberapa dari para anggota Komite Sentral ini dilaporkan mengetahui bahwa pembunuhan tersebut terjadi; beberapa di antaranya dilaporkan terlibat secara langsung dalam menentukan siapa yang harus dibunuh; beberapa di antara mereka dilaporkan hadir pada saat pembunuhan berlangsung.

197. Francisco Xavier do Amaral, pada Desember 1975 merupakan Presiden Fretilin dan Presiden RDTL. Ia mengatakan kepada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal pada Desember 2003 bahwa, meskipun tidak ada keputusan resmi Komite Sentral Fretilin untuk membunuh para tahanan, ketika Indonesia telah menginvasi, sentimen yang mendukung pembunuhan para tahanan terjadi di semua tingkatan:

Saya bisa menjelaskannya sebagai berikut. Saat itu tidak ada keputusan. Ketika Anda menuliskan sesuatu, saat itu kita katakan itu sebagai keputusan.

Kadang-kadang kami berbagi pendapat, kami bicara dengan teman-teman. Dan ide-ide kami ini, orang...menganggapnya sama dengan keputusan kami...

Oleh sebab itu, beberapa dari mereka [Fretilin] mengambil keputusan bahwa kami membunuh mereka, sehingga musuh tidak bisa membahayakan kami. Mungkin pendapat ini secara umum dipegang, paling tidak secara umum oleh para pemimpin di semua tingkatan.¹⁶²

198. Begitu invasi terjadi, perilaku para pemimpin menjadi mengeras, kadang-kadang karena dampak pribadi akibat kehilangan anggota keluarga. Pada keadaan seperti ini, para pemimpin secara perorangan berperilaku tidak konsisten. Seperti dicatat di atas, Komisi menerima laporan bahwa Nicolau Lobato mengintervensi untuk mencegah eksekusi terhadap sekelompok tahanan. Juga dilaporkan ke Komisi bahwa beberapa hari kemudian, ketika sekelompok tahanan Apodeti menolak perintah untuk membawa kotak-kotak amunisi dari Maubisse ke Same, Nicolau Lobato mengatakan kepada mereka agar tidak menguji kesabarannya lebih jauh, atau mereka akan dibunuh: "Jangan membuat saya marah, karena saya telah kehilangan keluarga saya. Saya telah kehilangan segalanya. Kalian harus bekerjasama." Belakangan, di Same, dia meminta maaf kepada mereka akibat ancaman tersebut.¹⁶³

199. Tapi, ketika situasi segera setelah invasi menjadi kacau dan perasaan bermusuhan terhadap mereka yang bekerjasama dengan Indonesia semakin tinggi, bukti yang tersedia di Komisi menegaskan bahwa pembunuhan selama periode ini tidak semua

terjadi secara acak, bahwa telah terbentuk pola penyiksaan terhadap para tahanan pada awal-awal bulan yang membuka jalan bagi terjadinya eksekusi, dan bahwa struktur-struktur dasar telah ada dan terus- berfungsi segera setelah invasi.

200. Beberapa bulan setelah invasi, ketika Aileu menjadi pusat penahanan utama bagi tahanan dari seluruh wilayah, suatu budaya penyiksaan, yang tidak menutup kemungkinan eksekusi, berkembang di Aileu. Mereka yang bertanggung jawab atas tahanan di sana tidak menghormati hak dasar para tahanan. Selama periode ini para tahanan sangat menderita, menjadi sasaran kekerasan kejam, dan dipaksa bekerja keras sementara mereka sering semakin lemah karena lapar dan penganiayaan. Akibat dari keadaan ini, banyak yang meninggal. Di Aileu, para pejabat Fretilin membentuk dan menjalankan struktur untuk menginvestigasi, mengadili, dan memenjarakan para lawan politik. Meskipun berbagai bentuk institusi tersebut gagal memberi jaminan dan perlindungan kepada para tahanan, mereka membentuk sistem yang beroperasi melalui sebuah rantai komando. Sistem yang sama juga sempat beroperasi di Same.

201. Ancaman pembunuhan khusus telah ada sejak pecahnya perang saudara. Meskipun banyak, atau mungkin hampir semua, pembunuhan awal yang dihubungkan dengan Fretilin pada bulan-bulan sebelum invasi 7 Desember kelihatannya merupakan pembunuhan balas dendam setempat, tidak semua begitu, terutama yang terjadi di Aileu. Menurut salah seorang saksi, persoalan apakah Fretilin harus membunuh para lawan yang ditahan telah diperdebatkan di antara para pemimpin segera setelah partai Fretilin melancarkan “kudeta balasan” yang berhasil pada Agustus 1975. Pada saat itu salah satu faksi menganjurkan untuk membunuh para tahanan terpilih UDT yang ditahan di Quartel Geral.¹⁶⁴ Beberapa tahanan UDT dibunuh di Marabia ketika mereka dipindahkan ke Aileu pada September 1975.¹⁶⁴

202. Francisco Gonçalves, salah seorang tahanan dari kelompok yang dipindahkan dari Dili ke Aileu pada 13 September 1975, ingat bahwa kelompoknya menerima peringatan yang menakutkan dari Presiden Fretilin, Francisco Xavier do Amaral:

[Pada] tanggal 13 September, ketika kami pindah ke Aileu, [pada] jam 4 pagi, Xavier do Amaral [datang] untuk bicara dengan kami, untuk memberikan informasi kepada kami. Kemudian dia berkata bahwa jika Indonesia menginvasi Timor-Leste, kami semua akan mati. Kami para tahanan, kami cocok untuk...pupuk—“ tahanan kopi,” kata Xavier.¹⁶⁵

203. Tidak lama setelah Fretilin melancarkan reaksi bersenjata dan mulai menangkapi para anggota UDT, Nicolau Lobato membentuk Komite Investigasi di Aileu yang dikepalai Lucas da Costa untuk menilai keterlibatan para tahanan UDT dalam aksi bersenjata UDT. Belakangan ketika Fretilin mulai menangkap

.....
* Mereka yang menganjurkan untuk membunuh para tahanan adalah Alarico Fernandes, Sebastião Montalvão, dan Domingos Reiberiro. [CAVR, wawancara dengan Humberto Martins da Cruz, Dili, tanpa tanggal]

para pemimpin Apodeti pada Oktober sebagai jawaban atas penyusupan pasukan Indonesia, Komisi ini juga menginvestigasi mereka, terutama untuk mendapatkan informasi rahasia tentang maksud Indonesia atas Timor. Namun demikian, beberapa waktu selama Oktober, kepala Komite Investigasi, Lucas da Costa, pindah ke Atsabe dan Komite ini dibubarkan.¹⁶⁶

204. Pengalaman satu kelompok anggota Apodeti, yang terdiri atas sekitar 12 orang yang berhasil lolos dari pembunuhan setelah ditahan ketika Fretilin mengambil tindakan keras atas pendukung Apodeti pada Oktober 1975, menunjukkan bagaimana penyiksaan terhadap para tahanan telah biasa terjadi pada periode itu.

205. Dalam sebuah wawancara dengan Komisi, Labut Melo mengingat bagaimana dia ditangkap di Dili pada 4 Oktober 1975 dan dipindahkan ke Aileu bersama pemimpin Apodeti lain pada 19 Oktober. Pada malam ketika mereka tiba di Aileu, kelompok ini dihadapkan pada Komite Investigasi. Proses “peradilan” berlangsung di tepi sungai dekat Aissirimou, dimulai tengah malam dan berakhir pukul 02.00 atau 03.00. Di antara yang hadir dalam peradilan itu adalah mereka yang terlibat dalam penyeleksian dan pembunuhan para tahanan pada Desember 1975, seperti Pedro Aquino, Paulo Manulin, dan Humberto Martins da Cruz. Menurut Labut Melo dan Herminio da Silva da Costa, anggota Apodeti yang juga diwawancarai Komisi, para tahanan diinterogasi tentang rencana invasi Indonesia dan mendapat ancaman mati dari orang-orang yang menjalankan peradilan, Lucas da Costa dan Pedro Aquino, serta dipukuli oleh bawahan-bawahan mereka.¹⁶⁷ Menurut Labut Melo:

Setelah kami selesai makan malam, ada perintah lain dari Comitê de Justiça [Komite Keadilan], atau “Tribunal de Justiça de Maubere [Pengadilan Hukum Maubere]”, atau apalah yang mereka punyai di Aissirimou di bawah perintah Lucas [da Costa], [Antonio] Barbosa [dan] Pedro [Aquino (Naimau)]. Pada dasarnya kami sekitar 25 orang berada di tangan mereka...Di Ribeira di [sungai] Aissirimou, kami disambut dengan tongkat kayu dan berbagai macam pukulan...Saat itu mereka memukul kami seperti memukul dengan martil...Saya tidak tahu apa yang kami katakan, suara apa yang keluar, atau airmata yang keluar, saya tidak tahu, yang penting kami disiksa sampai jam 2.00 atau mendekati jam 3.00 dini hari. Dan pertanyaan yang mereka ajukan kepada kami sama seperti yang diajukan pada pagi di hari pertama: “Saudara-saudaraku kalian telah berpikir keliru, karena kalian memilih Apodeti dan jika Indonesia masuk di sini, kalian semua ini tidak seorang pun yang akan hidup, tapi kalian akan mati semua.” Kemudian saya mengatakan kepada mereka bahwa: “Jika kita mati ya selesai sudah, kalau kita tetap hidup juga di tangan Tuhan dan Tuhanlah yang menentukan hidup atau mati kita ini”...Lucas [da Costa] dan Pedro [Aquino] Naimau yang memberikan perintah, sedangkan Paulo Manulin dan lainnya, seperti mereka yang butahuruf itu, mereka hanya melaksanakan tugas.¹⁶⁸

206. Para pemimpin Apodeti kemudian dikirim kembali ke Dili pada 22 Oktober dan ditahan di Comarca Balide sampai invasi pasukan Indonesia pada 7 Desember. Herminio da Costa da Silva dan Labut Melo secara terpisah mengatakan kepada Komisi bahwa mereka berutang nyawa pada para komandan senior di Dili atas intervensi mereka.^{*}

207. Meskipun praktik pembunuhan para tahanan mungkin telah mendapatkan dukungan dari beberapa pemimpin Fretilin dan para komandan Falintil, termasuk dari bawahan dalam kedua organisasi, hal itu tidak diterima secara umum. Komisi mendengar beberapa keterangan dari prajurit dan beberapa komandan yang menolak ambil bagian dalam pembunuhan dan dalam beberapa kasus memilih menghentikan pembunuhan. Segera setelah invasi pada awal Desember, Guido Soares, mantan wakil menteri pertahanan dan Kepala Staf Falintil, beserta pasukan di bawah komandonya meninggalkan Aileu menuju Ainaro, membawa serta sekelompok tahanan yang dibebaskan dari nasib para tahanan yang telah dibunuh di Aileu, Maubisse, dan Same.¹⁶⁹ Pasukan Falintil di Maubisse dilaporkan menolak rencana untuk terus membunuh sekitar 200 tahanan yang telah dibawa dari Aileu pada 8 Desember 1975. Sekelompok komandan dari wilayah timur berhasil menghentikan pembunuhan di Same pada akhir Januari 1976. Baik di Same maupun Maubisse, para pasukan yang menolak untuk membunuh memberikan alasan yang sama: "Mereka adalah sesama orang Timor seperti kita, kita seharusnya tidak membunuh mereka."¹⁷⁰

Tanggung jawab Fretilin dalam pembunuhan massal pada Desember 1975 dan Januari 1976

Anggota dan mantan anggota Komite Sentral Fretilin membicarakan tentang pembunuhan di luar hukum terhadap tahanan UDT dan Apodeti oleh pasukan Fretilin/Falintil selama Audiensi Publik Nasional Komisi tentang Konflik Politik Internal 1974 – 1976, pada Desember 2003. Xanana Gusmão, yang ketika itu anggota Komite Sentral Fretilin, bertutur mengenai pembunuhan tersebut:

Para tahanan UDT dan Apodeti dibawa ke gunung tidak dengan tujuan untuk dibunuh, tetapi pasukan payung [Indonesia] telah diterjunkan... Pasukan Indonesia telah menduduki Dili, bertambah dan terus bertambah.

Pembantaian di Aileu, kita bisa mengatakan bahwa [pembantaian] itu berbau dendam politik, tetapi saya tidak percaya hal itu. Itu bukan politik [kebijakan] partai, tetapi terutama karena ketiadaan kontrol.

^{*} Herminio da Silva da Costa mengatakan bahwa mereka diselamatkan oleh empat komandan Falintil yang diutus ke Aileu oleh Rogério Lobato setelah ICRC bertindak atas nama para pemimpin Apodeti. Labut Melo yakin bahwa Nicolau Lobato adalah pusat segala perintah, yang menanggapi intervensi Sersan Constancio Soares, kerabat dari istri salah seorang tahanan, Antonio Parada.

Pada saat invasi, para anggota militer [Fretilin] hanya mengabaikan kami para anggota Komite Sentral Fretilin dan anggota politik sipil. “Siapa kalian?” [kata mereka kepada kami]. Jika kami memegang senjata, mereka berkata “kalian tidak perlu memegang senjata, serahkan saja kepada kami para serdadu... Kalian melarikan diri saja.” Situasi ini hampir tidak terkontrol, sehingga masyarakat Dili mulai menyingkir ke pegunungan... Saya tidak bisa mengatakan bahwa pembantaian itu adalah suatu program politik yang direncanakan atau sebagai strategi politik. Itu sudah terjadi, ya terjadi ada semacam dendam politik. Sama halnya dengan pembantaian di Same yang menunjukkan bahwa Komite Sentral Fretilin tidak mempunyai kapasitas [untuk mengontrol]...lawan semakin mendesak, Estado Mayor Falintil dan Komite Sentral Fretilin hanya memusatkan perhatian pada kekuatan lawan... Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa partai melakukan [pembantaian] itu, tidak. Masalahnya adalah bahwa pasukan [Fretilin] datang dari arah timur, datang dari arah perbatasan, lalu [pasukan] yang terakhir didatangkan ke Dili. [Tetapi] pasukan payung musuh sudah masuk Baucau, mendarat di Lospalos, dan mendarat di Viqueque. Pasukan Fretilin yang berasal dari timur ingin kembali ke timur...Situasi sudah benar-benar tidak terkontrol...Kita tidak bisa mengatakan bahwa Fretilin mengorganisir semua ini...²¹⁷¹

Mari Alkatiri, yang saat itu salah seorang anggota Komite Sentral Fretilin, menuturkan kepada Komisi bahwa Fretilin sebagai organisasi harus bertanggung jawab:

Jika Anda mau saya mengatakan siapa yang membunuh mereka, saya tidak tahu. Saya tidak ada di sana. Sebagian orang mengatakan bahwa itu pembantaian oleh Fretilin dan Fretilin sebagai organisasi harus bertanggung jawab. Tetapi itu bukan pembantaian oleh Fretilin melainkan pembantaian oleh elemen-elemen Fretilin, tetapi sebagai organisasi Fretilin harus bertanggung jawab dalam konteks itu dan [dalam konteks itu] saya tidak akan melarikan diri...Sekarang siapakah yang bertanggung jawab atas mereka yang meninggal di Aileu dan di Same? Jika kita melihat dari sudut pandang keadilan, kita perlu mempertimbangkan tanggung jawab perorangan. Siapa yang memerintahkan pembunuhan? Dari sudut pandang politik, menjadi masalah tanggung jawab kolektif, tanggung jawab organisasi. Jadi harus diperhatikan dua [pendekatan] ini, sehingga tidak mencampurkan tanggung jawab individu dan tanggung jawab kolektif.

Dari sudut pandang politik, bahkan jika [pembantaian] itu bukan merupakan tujuan atasan, tetap menjadi tanggung jawab organisasi yang tidak mampu mengontrol itu...Mereka mungkin saja tidak menyetujui apa yang terjadi, tetapi itu merupakan hal yang berbeda.

Jika tidak terkontrol pun, tetap merupakan tanggung jawab politik. Sekarang saya sendiri mencari tahu siapa yang memerintahkan pembunuhan, siapa yang memberi perintah. Tapi sampai sekarang saya harus mengakui bahwa saya tetap belum tahu. Jika saya tahu saya akan mengatakannya, tidak di depan publik tapi saya akan mengatakannya pada Komisi.¹⁷²

Francisco Xavier do Amaral, yang menjadi Presiden Fretilin saat itu, menggambarkan pilihan sulit yang dihadapi oleh Fretilin karena pasukan Indonesia tengah bergerak maju. Ia yakin bahwa tidak ada keputusan resmi yang telah diambil pada tingkat Komite Sentral atau pemerintahan, tetapi keputusan diambil atas dasar ketakutan dan kepanikan, kadang-kadang dengan persetujuan perorangan pemimpin senior Fretilin:

Saya bisa menjelaskannya sebagai berikut. Saat itu tidak ada keputusan. Ketika Anda menuliskan sesuatu, kemudian kami katakan itu sebagai sebuah keputusan.

Kadang-kadang kami berbagi pendapat, kami bicara dengan teman-teman. Dan semua ide-ide kami ini, orang...menganggapnya sama dengan keputusan kami. Karena pemikiran-pemikiran kami hanyalah opini-opini kami. Kadang-kadang saya memiliki opini, dan saya ungkapkan.

Kita dalam keadaan perang; dalam perang ini, kalau kita mundur, lawan mengejar kita; jika kita mundur, kita membawa serta tahanan, [yaitu] lawan kita yang menjadi tahanan kita. Di saat kita belum sempat mengambil napas, lawan sudah mendekat. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Kita harus terus berlari. Kita tidak punya banyak pilihan. Tidak ada transportasi, tidak ada makanan, terkadang tidak ada obat-obatan, tidak ada semuanya ini.

Sebagian tahanan dalam keadaan sakit keras, sebagian sudah sangat lemah. Jadi kami harus memperhatikan semua ini. Apakah kami merawat mereka? Apakah kami akan meninggalkan mereka sendirian? Atau kami harus membunuh mereka sebelum kami menyingkir? Dari kedua [kemungkinan] ini, saya melihat ada bahayanya. Kalau kami meninggalkan mereka dalam keadaan hidup, mereka pasti jatuh ke tangan lawan. Jadi kalau kami meninggalkan satu tahanan, misalnya salah seorang anggota UDT atau Apodeti, ia bisa saja jatuh ke tangan musuh. Jika pasukan Indonesia masuk, dia bisa jatuh ke tangan mereka. [Pasukan] Indonesia akan menekan dia dan mereka akan menemukan kami. [Apakah kami] berada di kota atau di mana saja, dia bisa mengaku. Oleh karena itu kami sampai kepada kesimpulan bahwa jika mereka sudah dalam keadaan lemah dan mereka tidak berjalan dengan kami, kami ingin membawa mereka tetapi kami

tidak punya kekuatan, tidak ada jaminan bahwa kami bisa membawa mereka ke mana kami pergi, maka pilihannya adalah apakah dia yang mati atau kami yang mati? Kadang-kadang, keputusan diambil untuk membunuh mereka supaya musuh tidak membahayakan kami. Mungkin opini ini dipegang secara umum, lebih kurang, di semua level di kalangan pemimpin.¹⁷³

Rogério Lobato, mantan Komandan Angkatan Bersenjata, dalam sebuah kesaksian yang menyentuh, mengungkapkan kesedihannya atas kehilangan tragis di kedua pihak yang berkonflik dan rasa tanggung jawab atas apa yang terjadi:

Saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi perang ini banyak sekali yang gugur. Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun. Yang penting bagi kita di sini adalah mengetengahkan fakta... Sepengetahuan saya, saya tidak tahu bahwa ada tahanan UDT yang dibunuh Fretilin. Kemungkinan itu terjadi saat saya tidak berada di Aileu... Saya ingin... memusatkan pada keprihatinan Komisi, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Pada saat itu saya adalah komandan angkatan bersenjata, saya harus memikul tanggung jawab terhadap sebagian hal yang terjadi dalam perang itu...¹⁷⁴

Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa yang dilakukan ABRI setelah invasi Indonesia, 1976-1979

208. Data yang dikumpulkan Komisi memperlihatkan peningkatan yang menerus dalam jumlah pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan kakitangan mereka selama 1976 – 1979, dan mencapai puncaknya pada 1978 – 1979.

209. Sepanjang masa antara 1976 sampai akhir 1978 tentara Indonesia perlahan mengonsolidasi penguasaannya atas wilayah Timor-Leste. Barulah pada akhir periode ini mereka berhasil menguasai sepenuhnya wilayah Timor-Leste. Pada akhir 1976, pasukan pendudukan Indonesia menguasai kota-kota dan jalan-jalan utama. Keadaan ini memaksa gerakan Resistansi Timor-Leste dan banyak penduduk sipil mengungsi ke gunung dan hutan di pedalaman. Dari akhir 1977, momentum perang mulai bergerak secara pasti menguntungkan tentara Indonesia, ketika daerah-daerah basis yang dikuasai Fretilin/Falintil jatuh ke tangan Indonesia. Pada pertengahan 1978 semua kota-kota subdistrik sudah dikuasai Indonesia dan ABRI mulai melancarkan serangan terakhirnya terhadap wilayah-wilayah pemusatan penduduk yang masih bertahan di daerah-daerah seperti Alas di Manufahi, Dataran Natarbora (Manatuto), Gunung Ilimano di Manatuto, dan di Gunung Matebian. Sekali terjebak di daerah-daerah yang terkurung ini, para penduduk menjadi

sasaran pengeboman hebat dari darat, udara, dan laut oleh pasukan Indonesia. Fretilin/Falintil tidak bisa lagi mempertahankan diri dan penduduk yang mengikuti mereka. Sepanjang periode ini ratusan ribu penduduk Timor-Leste ditangkap oleh, atau menyerah kepada, pasukan Indonesia. Sejak awal 1979 sebagian besar penduduk Timor-Leste hidup di bawah kekuasaan Indonesia, biasanya di dalam kamp-kamp pemukiman kembali dalam keadaan yang sangat dibatasi (lihat Bab 7.3: Kelaparan dan Pemindahan Paksa).

210. Walaupun banyak warga sipil Timor-Leste yang selama periode ini ditahan di tempat-tempat penahanan militer, para tawanan ABRI itu ditahan tanpa dakwaan atau proses pengadilan. Pembunuhan-pembunuhan terjadi dalam berbagai macam keadaan. Terjadi pembunuhan sembarang terhadap warga sipil yang sedang melakukan kegiatan sehari-hari; pembunuhan terhadap warga sipil selama operasi-operasi militer; pembunuhan terhadap tahanan; pembunuhan seketika terhadap penduduk yang menyerah; dan pembunuhan bersasaran terhadap para anggota Fretilin dan petempur yang menyerah.* Namun semua pembunuhan terhadap warga sipil dalam tahanan adalah di luar hukum dan tidak sah.

211. Bagian ini terdiri atas dua subbagian. Yang pertama menggambarkan pola umum pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan ABRI dan pasukan pembantu mereka sepanjang periode 1976 – 1979. Yang kedua memusatkan perhatian pada 1978 – 1979, setelah jatuhnya *bases de apoio*, ketika pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan ABRI dan pasukan pembantu mereka mencapai puncaknya. Subbagian ini juga mengemukakan bukti-bukti Komisi bahwa selama kurun waktu tersebut ABRI melakukan serangan terkoordinasi untuk membasmi para pemimpin Fretilin/Falintil yang telah menyerah atau ditangkap.

Pola pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa yang dilakukan ABRI, 1976-79

Penduduk sipil yang terbunuh selama operasi militer

212. Komisi telah mendengar banyak kesaksian tentang pembunuhan sewenang-wenang terhadap warga sipil yang dijumpai anggota ABRI yang sedang berpatroli atau sedang melakukan operasi militer. Dalam banyak kasus serupa ini, para warga sipil dibunuh secara sembarang ketika pasukan Indonesia sedang memperluas kekuasaan mereka di daerah-daerah baru, atau sedang melakukan operasi di daerah-daerah yang tidak bertuan. Walaupun banyak penduduk sudah lebih dulu melarikan diri sebelum penyerbuan, mereka yang masih tertinggal atau yang sial bertemu dengan patroli Indonesia biasanya langsung ditembak saat terlihat. Misalnya:

- Americo da Costa dan istrinya dibunuh ABRI ketika ABRI masuk Hera pada 16 Januari 1976. Falintil mundur dengan meninggalkan beberapa orang

* Saat menyerah, orang kehilangan status mereka sebagai petempur dan mendapat perlindungan sebagai tawanan perang. Tapi secara sistematis ABRI melanggar hak perlindungan ini dan dengan aktif menjadikan anggota-anggota Falintil yang menyerah sebagai sasaran dan dibunuh.

penduduk desa. Americo da Costa dan istrinya ditemukan ABRI ketika mereka sedang memetik jagung, dan langsung ditembak mati.¹⁷⁵

- Pada 11 Februari 1976 pasukan ABRI masuk Lelaos (Dare, Dili). Mereka membayonet mati dua orang penduduk, Antonio Soares dan Inácio de Jesus.¹⁷⁶
- Pada awal Maret 1976 Batalion 315, 512, dan 401 ABRI, dengan bantuan satuan Armed (Artileri Medan), memasuki Subdistrik Letefoho (Ermera). Mereka mulai mencari-cari dan menyerang tempat persembunyian penduduk. Di Desa Hatugau mereka menembak mati Sebastião Lemos. Di Erelau mereka menawan dua orang yang dicurigai berusaha melakukan kontak dengan Falintil, Cristovão Soares dan Filomeno, dan mengeksekusi mereka di Mandoki Lau. Mereka terus mengganggu penduduk, mengakibatkan mereka melarikan diri, mula-mula ke Hutan Talo di Hatolia, lalu kembali ke Tata di Letefoho. Orang-orang yang selamat dan tinggal di Eraulo dimukimkan di Kota Letefoho, tempat mereka tinggal selama tiga tahun.¹⁷⁷
- Seorang deponen menceritakan kejadian ketika pasukan dari Batalion 726 memasuki subdistrik Railaco (Ermera) pada April 1976. Ia melarikan diri bersama istri dan anak-anaknya ke Halaltur di Desa Railaco Leten. Istrinya sakit parah dan mendesak keluarganya pergi meninggalkannya agar tidak dibunuh oleh pasukan Indonesia yang sedang bergerak maju. Keluarga itu memenuhi nasihatnya. Ketika Batalion 726 menemukannya seorang diri, sedang tidur di sebuah gubuk, mereka menembaknya mati itu.¹⁷⁸
- Sekitar waktu itu juga Vicente de Jesus dan istrinya, Raimunda da Conceição, ditembak mati oleh satu satuan ABRI tak dikenal dan Partisan, ketika mereka masuk subdistrik Railaco (Ermera). Vicente tewas karena luka-lukanya. Istrinya terluka di paha tetapi selamat.¹⁷⁹
- Dalam Maret 1978, ketika ABRI menyerang Gunung Bibileo (Viqueque), penduduk yang terkumpul di sana tercerai-berai. Seorang deponen menuturkan kepada Komisi bahwa bibinya yang sudah tua tertinggal. Beberapa hari kemudian, deponen dan kakak laki-laknya kembali ke desa itu. Mereka mendapati perempuan tua itu sudah mati ditembak ABRI, dan jasadnya sudah separuh dimakan anjing.¹⁸⁰

Penduduk dibunuh ketika sedang bekerja sehari-hari

213. Sejak hari-hari pertama pendudukan, nyawa penduduk sipil, yang sedang mencari makan di tempat tentara Indonesia membangun pos mereka atau melakukan operasi, juga dalam bahaya. Misalnya:

- Sesudah Indonesia menduduki Betano (Same, Manufahi) Januari 1976, deponen dan keluarganya melarikan diri ke *aldeia* Fatumeta yang dekat. April 1976, empat orang anggota keluarganya ditembak marinir ketika sedang keluar mencari makan di Bermet Buiudo, dekat pos marinir itu. Ibu dan bibi deponen meninggal karena luka-luka mereka.¹⁸¹

- Pada September 1976 tentara Indonesia memasuki Desa Selo (Aileu, Aileu). Empat orang penduduk, Martinho, José, Martina, dan Teresa, karena sangat kekurangan makan, pergi ke *aldeia* Lio, Desa Selo Kraik (Laulara, Aileu) untuk mencari singkong. Serdadu-serdadu Indonesia menangkap Martina dan menembak mati Teresa. Martinho dan José berhasil lolos dan menyelamatkan diri di sebuah pos Falintil. Karena dicurigai bekerjasama dengan ABRI, mereka dikirim ke Weberek (Alas, Manufahi).¹⁸²
- Carlito dan Armindo berjumpa patroli ABRI ketika sedang berburu di daerah Rate Naruk (Viqueque, Viqueque) pada 7 Februari 1977. Satuan ABRI yang tak dikenal itu menembak mereka. Armindo mati seketika. Carlito terluka parah, tetapi ditemukan pamannya pada hari berikut dan berhasil disembuhkan.¹⁸³
- Juli 1977 tentara Indonesia menjumpai Justina dan suaminya, Talo Mali, ketika mereka sedang mencari makanan di hutan di Subdistrik Atsabe (Ermera). Justina dan Talo Mali ditangkap karena dicurigai mencari bahan pangan untuk Fretilin/Falintil. Mereka ditahan sepuluh hari di Atsabe, tempat Talo Mali terus-menerus diinterogasi sambil dipukuli dan dimasukkan ke air. Talo Mali kemudian diserahkan kepada satu pasukan yang termasuk dalam satuan Armed (Artileri Medan). Ia dibawa ke Airea, Desa Paramin (Atsabe, Ermera), tempat ia dipaksa berdiri di bibir lubang besar yang digali oleh pasukan itu, dan ditembak mati.¹⁸⁴

214. Komisi menerima sejumlah pernyataan tentang pembunuhan terhadap warga sipil yang ditawan di kamp-kamp penahanan, sesudah penyerahan diri massal pada akhir 1978.¹⁸⁵ Menghadapi kelaparan, mereka terpaksa meninggalkan kamp, pergi ke hutan atau bekas ladang-ladang, untuk mencari daun-daunan, umbi-umbian yang bisa dimakan, atau nira. Mereka tahu, jika sampai ketahuan, mereka akan dituduh menghubungi Falintil, dan tentu saja akan dibunuh. Pastor José Tavares mengingat keadaan di kamp konsentrasi, di subdistrik Natarbora, Manatuto, tempat ia menyerahkan diri pada 1978:

*Mereka yang di dalam kamp tidak diizinkan pergi...kecuali jika ada perintah untuk itu dari ABRI. Mereka yang kelaparan terpaksa diam-diam pergi berburu di hutan. Jika ketahuan mereka pergi melewati pagar pembatas, mereka akan dituduh...[mempunyai] hubungan dengan Falintil. Orang-orang ini...biasanya akan dibunuh seketika.*¹⁸⁶

215. Tahun 1978, pada penyerahan diri secara massal di Matebian, sekelompok penduduk menyerah kepada ABRI di Venilale, Baucau. Sang deponen, salah seorang dari rombongan ini, sudah kira-kira satu tahun ditahan di markas Koramil (Komando Rayon Militer) di Venilale. Ketika dibebaskan Desember 1979, ia mengetahui bahwa istrinya, Ermelinda, dan dua anak perempuannya, Joana dan Anina, telah dipukuli sampai mati oleh tentara dari Batalion 721 dan 503, ketika para perempuan itu berada di daerah Uaihae di Uaioli untuk mencari makan. Menurut seorang laki-laki yang bersama mereka dan selamat, jenazah perempuan-perempuan itu dibakar.¹⁸⁷

Pada Agustus tahun yang sama, empat orang penduduk yang sudah menyerah juga sedang mencari makan. Mereka tidak punya surat jalan untuk meninggalkan kawasan di sekitar kamp. Di Gunung Tokegua di Samagata, Desa Sagadate (Laga, Baucau), mereka ditangkap oleh Batalion 141. Salah seorang dari mereka, Anurai, dibawa ke Sungai One Bu'u dan dibunuh di sana. Seorang lagi, Kotedora, dibawa ke Kotamutodo dan dibunuh di depan seluruh penduduk desa, termasuk perempuan dan anak-anak. Orang ketiga dibunuh di Uasagia (Laga, Baucau).¹⁸⁸

216. Sebastião da Costa, saudara laki-lakinya, Paulino, dan dua saudara perempuannya, Isabel dan Maria, ditangkap ketika sedang mencari makanan. Mereka ditangkap pada 1979 di Lakawa (Baguia, Baucau) oleh pasukan dari Batalion 141, yang kemudian menahan mereka di kandang kerbau. Sebulan kemudian keluarga mereka mendapati mayat-mayat mereka yang sudah membusuk di kandang itu, lalu memakamkan mereka dengan selayaknya.¹⁸⁹

217. Loi Lu dan keluarganya menyerah pada 1978. Mereka tinggal di pinggir jalan di Uaioli (Venilale, Baucau). Karena ia terlalu lemah berjalan akibat kelaparan, dan keluarganya tidak diberi makan, Loi Lu mencuri nangka milik Pedro untuk memberi makan keluarganya. Pedro menangkapnya dan menyerahkannya kepada *Liurai* Antonio. Selanjutnya *Liurai* Antonio menyerahkannya ke Batalion 745, yang membawanya ke Natarbora di Manatuto, dan di sana mereka membunuhnya.¹⁹⁰

218. September 1979, ketika pasukan Indonesia sedang bersiap melakukan serangan besar di kawasan itu, tentara dari Kodim Viqueque menangkap Leki-Rubi di Uaimata Rae (Ossu, Viqueque), ketika ia sedang pergi untuk menanam ladangnya. Mereka langsung membunuhnya.¹⁹¹

Penduduk dibunuh karena dicurigai bekerjasama dengan Fretilin/Falintil atau mengetahui tentang mereka

219. Sejak hari-hari awal pendudukan, banyak penduduk yang tinggal di daerah-daerah yang dikuasai Indonesia dibunuh karena dicurigai menjalin hubungan dengan Fretilin/Falintil. Misalnya:

- Marcelo dan keluarganya menyerah pada ABRI pada 1976 di Bazartete (Liquiça). Mereka diizinkan kembali ke desa asal mereka di Lehata. Kepada pasukan dari Batalion 401 yang sedang berpatroli, seorang Timor-Leste kenalan Marcelo melaporkan Marcelo dan sepupunya, Manuel, sebagai mata-mata Fretilin. Pasukan itu menembak Manuel, yang lari ke rumahnya di *aldeia* Pisulete. Hari berikutnya para tentara dari batalion tersebut mencari dan menangkap Manuel. Mereka menembak mati Manuel dan membawa enam pemuda dari desa itu. Pada hari berikut penduduk Bazartete disuruh berkumpul di depan gereja setempat. Sesudah mereka berkumpul, ABRI menyuruh mereka menggali lubang besar. Kemudian enam pemuda itu dibawa keluar dari bekas markas Kompi Portugis; jelas terlihat bahwa mereka telah disiksa habis-habisan di situ. Tentara Batalion 401 membariskan enam pemuda itu berjajar di bibir lubang dan menembak mati mereka.¹⁹²

- Tahun 1976, Maubere adalah salah seorang dari 13 laki-laki dan 2 perempuan yang telah direkrut di Subdistrik Bobonaro oleh komandan Partisan bernama M218, untuk menjadi TBO bagi ABRI. Suatu hari tentara Indonesia dan para Partisan menangkap 13 orang itu dan mengikat mereka, menuduh mereka mengambil amunisi untuk diberikan kepada Fretilin. Ketigabelas orang tersebut diberitahu akan dibawa ke Hauba (Bobonaro) untuk dibunuh. Setiba di Hauba, mereka melepaskan semua orang laki-laki, kecuali Maubere, yang segera mereka bunuh. Mayatnya dilempar ke kali dan tidak pernah ditemukan.¹⁹³
- Pada 23 Maret 1976, dua anak muda, Cristovão dan Filomeno Soares, membawa makanan dan pakaian untuk Sekretaris Fretilin Zona Letefoho (Ermera), yang telah membangun hubungan klandestin dengan mereka. Patroli dari Batalion 512 menyergap dua anak muda itu dan meminta mereka agar membantu patroli mencari orang-orang Fretilin/Falintil di hutan. Kedua anak muda itu menolak dan ditembak mati di suatu tempat bernama Marconi di Eraulo (Railaco, Ermera).¹⁹⁴

220. Para tawanan juga dibunuh karena tidak mau mengaku atau memberi informasi yang diperlukan oleh para interogator. Pada 1978, misalnya, anggota Batalion 403 membunuh dua orang, Anselmo dan Antonio Cardoso, di Gunung Derok Loke (Lacluta, Viqueque), karena mereka tidak bisa menunjukkan tempat Xanana Gusmão berada, atau di mana Falintil menyembunyikan senjata.¹⁹⁵

221. Pada 1979, seorang tawanan, Manuel da Silva, dipertemukan dengan João da Rosa di markas Kodim di Viqueque. Para interogator menuntut Manuel da Silva agar menyatakan bahwa João da Rosa telah memasok bahan pangan pada Falintil. Ketika Manuel da Silva dengan tegas mengatakan bahwa pemasok itu bukan João da Rosa tapi seseorang yang lain, seutas tali dililitkan di leher Manuel dan ditarik hingga ia tewas.¹⁹⁶

Penduduk sipil dibunuh sebagai pembalasan terhadap serangan Falintil

222. Pasukan Indonesia juga dilaporkan membunuh penduduk sipil sebagai pembalasan terhadap serangan Falintil. Dalam beberapa kejadian yang dilaporkan kepada Komisi, tampaknya pembunuhan-pembunuhan itu merupakan bentuk tindakan tanpa pandang bulu atau hukuman kolektif, yang dimaksudkan sebagai peringatan umum bagi penduduk dan untuk mencegah serangan Falintil selanjutnya:

- Pada Januari 1976 tentara Indonesia membalas serangan Falintil terhadap Hauba (Bobonaro), dengan menangkap sembilan warga sipil dari desa itu dan membawa mereka ke Atsabe, tempat mereka dibunuh.¹⁹⁷
- Pada 4 Maret 1976 sekelompok anggota Apodeti menangkap 16 penduduk sipil Timor-Leste dan membawa mereka ke Subdistrik Hato-Udo (Ainaro). Di sana mereka disekap dalam sebuah rumah dan dipaksa bekerja untuk satuan ABRI yang ditempatkan di sana. Dalam Maret itu terjadi serangan

Falintil di daerah tersebut, dan dalam serangan ini korban jatuh di pihak pasukan Indonesia. Empat dari enam belas orang tawanan dibawa oleh seorang tentara Indonesia bersama seorang Timor-Leste ke Betano, Manufahi, dengan dalih untuk membongkar muatan kapal. Mereka tidak pernah terlihat lagi.¹⁹⁸

Penduduk sipil dibunuh selama serangan ABRI

223. Walaupun terbunuhnya penduduk sipil tanpa sengaja di tengah pertempuran dan matinya penduduk sipil di tengah tembak-menembak tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dalam beberapa kejadian Komisi sulit menentukan apakah anggota ABRI cukup peduli untuk membedakan antara petempur bersenjata dengan penduduk sipil dan menghindari jatuhnya korban di kalangan penduduk sipil dengan menggunakan kekuatan secara tepat sasaran dan proporsional. Dalam sejumlah kejadian, serangan ditujukan pada kelompok-kelompok yang sepenuhnya terdiri atas warga sipil:

- Komisi mendengar satu peristiwa yang terjadi pada awal peperangan, di mana sekelompok warga sipil berusaha mempertahankan diri terhadap pasukan penyerang. Pada 15 Maret 1978, ketika Batalion Infanteri 509 menyerang Kota Ainaro (Ainaro), kira-kira 60 orang penduduk berusaha melawan para penyerbu yang bersenjata lengkap. Sebagian besar penduduk itu tewas dibunuh.¹⁹⁹
- Pada Mei 1977, ABRI menyerang sekelompok penduduk yang bersembunyi di Gunung Kablaki, antara Ainaro dan Manufahi. Sepuluh orang tewas dalam serangan ini.²⁰⁰
- Pada 1978, pasukan dari Batalion 744 dan 745 melakukan serangan atas Aisapu, Desa Asulau (Hatolia, Ermera). Dalam serangan itu mereka membunuh sejumlah besar penduduk. Seorang deponen yang melaporkan serangan ini kepada Komisi mengumpulkan keterangan dari sekitar 13 keluarga secara terpisah, yang selama serangan telah kehilangan 88 anggota keluarga mereka. Setidak-tidaknya beberapa orang korban dilaporkan berada dalam tahanan para tentara ketika mereka dibunuh. Di antara mereka termasuk para anggota satu klan dari *uma kain* (kelompok rumahtangga keluarga) Poeleu, yang kehilangan 15 orang anggota keluarga mereka.²⁰¹

Penduduk sipil yang dibunuh setelah berada dalam tahanan pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantu mereka

224. Sejak hari-hari awal perang, secara rutin ABRI menahan penduduk.²⁰² Dalam banyak kejadian, penangkapan itu langsung berlanjut dengan eksekusi mendadak. Dalam kejadian lainnya, korban pertama-tama disiksa atau dianiaya, atau dibawa ke tempat lain, kemudian dibunuh. Pola pembunuhan seperti ini terjadi selama periode 1976 – 1979.

- Januari 1976 lima orang seketika dibunuh, segera sesudah mereka ditangkap oleh Batalion 126 di Hatugeo (Atsabe, Ermera).²⁰³
- Pada 1976, José Cortereal dan keluarganya menyerah di Tirilolo, Hola Rua (Same, Manufahi). Oleh sepasukan tentara Indonesia dan Hansip mereka dibawa ke Lesulau di Hola Rua, di mana dua orang di antara mereka, Sirimau dan Calistro, ditembak mati.²⁰⁴

225. Banyak pembunuhan terhadap penduduk sipil terjadi dalam tahanan militer. Para korban ditangkap, lalu dibawa ke tangsi militer dan dibunuh. Dalam kejadian-kejadian lain, penduduk sipil hilang sesudah ditangkap atau ditahan: Mereka dianggap telah dibunuh, tetapi tidak ada saksi yang tampil dan memberikan pembenaran tentang nasib mereka itu.²⁰⁵ Misalnya:

- Pada 1976, tiga orang penduduk dipanggil ke pos Batalion 327 di Mau Ulo (Maubisse, Ainaro). Para serdadu memerintahkan agar mereka diikat. Kemudian seorang dibebaskan, tetapi dua orang lainnya dibawa pergi menuju Kota Ainaro dan tidak pernah muncul kembali.²⁰⁶
- Antonio dos Reis menceritakan pada Komisi bagaimana ia, ayah, dan kakaknya, keluar hutan dan menyerah kepada Batalion 405 di Maubisse (Ainaro) pada April 1976. Selagi dalam tahanan mereka sering dipukuli dan ditendangi, dan tiap malam dibenamkan dalam air. Satu tahun kemudian Antonio dan kakaknya dilepaskan, tetapi pasukan Indonesia membunuh ayah mereka, Francisco Xavier, dan mengubur mayatnya di dekat *pousada* (losmen) di Maubisse.²⁰⁷
- Januari 1976 ABRI memasuki Ossu (Viqueque), mengakibatkan banyak keluarga melarikan diri. Pada 23 September 1976 ABRI menangkap lima orang yang pada Januari sebelumnya telah melarikan diri ke hutan. Di antara mereka termasuk Leki Gari. ABRI membawa mereka ke markas Koramil di Ossu, tempat banyak penduduk lain sudah ditangkap karena dicurigai bekerjasama dengan gerakan Resistansi. Di Koramil mereka mengalami interogasi disertai pemukulan dengan pistol dan pipa baja dan tendangan-tendangan. Leki Gari dan tawanan lain bernama Olobere lalu dibawa ke markas Batalion 202 di Ossu, di mana juga sudah banyak tahanan lain. Petang itu juga Olobere, Leki Gari, dan seorang lainnya yaitu Mariano, dibawa dari markas Batalion 202 dan ditembak mati.²⁰⁸
- Pada 8 November 1978 serdadu-serdadu dari Koramil di Laga, Distrik Baucau, datang ke Desa Soba (Laga, Baucau) dan menangkap Pedro Pereira. Mereka membawanya ke markas polisi militer di Desa Laga untuk diinvestigasi. Menjelang senja Pedro Pereira dikembalikan ke Soba bersama para penangkapnya. Serdadu-serdadu itu menangkap dua orang lagi dari Roó Liu, Gregório Pereira dan João Pereira, lalu membawa mereka ke pos komando militer. Pada hari berikutnya João dan Pedro Pereira dibawa ke Baucau dan hilang.²⁰⁹

226. Satuan-satuan ABRI juga membunuh perempuan dan anak-anak yang ada dalam tahanan mereka. Komisi mendengar, pada Januari 1976 seorang perempuan dan dua anaknya ditangkap tentara Indonesia di Tailau di Ermera. Perempuan yang sedang hamil itu saudara seorang komandan Falintil, dan hal ini dilaporkan oleh seorang informan. Serdadu-serdadu Indonesia dan dua partisan orang Timor-Leste memerkosa perempuan itu. Pada hari berikutnya ABRI membunuh perempuan itu dan anak-anaknya.²¹⁰

227. Perempuan-perempuan yang disekap dalam tahanan tentara Indonesia juga punya kemungkinan hilang. Selama penyerangan terhadap Gunung Matebian dalam Oktober – November 1978, seorang ibu, Luciana, dan dua anak perempuannya, Etelvina dan Albertina, terluka akibat serangan Batalion Infanteri 202. Luciana dibawa ke Dili untuk mendapat perawatan dan berhasil disembuhkan. Etelvina dan Albertina dibawa ke rumah sakit di Baucau. Sekembalinya dari Dili, Luciana berusaha mencari dua anaknya di rumah sakit, tetapi pegawai rumah sakit tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Mereka tidak pernah ditemukan.²¹¹

228. Orang-orang Timor-Leste kakitangan ABRI juga menahan orang-orang yang menyerah, dan membunuh mereka. Komisi menerima beberapa pernyataan yang menceritakan pembunuhan-pembunuhan terhadap mereka yang telah menyerah, yang dilakukan oleh satuan Tonsus (Peleton Khusus) yang dibentuk oleh Kopassandha di Subdistrik Barique, Soibada, dan Laclubar (Manatuto):

- Februari 1979, lima orang, yaitu Manuel Carlos, Lekihonik, Pinto, Raimundo de Oliveira, dan Armando Soares, yang baru saja menyerah di Orlalan (Laclubar, Manatuto), dibawa oleh satuan Tonsus di bawah pimpinan M312 ke pangkalan Kopassandha di Orlalan. Setelah seminggu dalam tahanan, tempat mereka terus-menerus dipukuli, kelima orang itu diikat bersama dengan tali pada leher, dibawa oleh empat Tonsus ke suatu tempat bernama Manglima, dan di sana mereka ditembak mati.²¹²
- Di daerah yang sama pada 1979, dua orang penduduk sipil yang disebut sebagai “tersangka pendukung Fretilin” yaitu Mali Arus dan Miguel Daholo, diambil oleh anggota-anggota Tonsus tidak lama sesudah mereka menyerah. Mereka dibawa ke Laclubar dan dipukuli terus-menerus sepanjang jalan. Sampai di Laclubar, Mali Arus masih terus mengalami pemukulan sehingga meninggal dua minggu kemudian. Tiga minggu kemudian, deponen sendiri dan lima orang lainnya, termasuk ayahnya, Graciano Bere Mauk, dan saudara-saudara sepupunya, Martinho dan Mau Leki, juga menyerah dan dibawa ke pos Tonsus di Orlalan. Tidak lama kemudian, tiga orang dari kelompok ini, yaitu Graciano Bere Mauk, Martinho, dan Mau Leki dibawa keluar dan ditembak mati oleh anggota-anggota Tonsus.²¹³

229. Banyak penduduk sipil yang dibunuh selama interogasi dan penyiksaan, atau setelah dipukuli dengan hebat selama dalam tahanan militer.²¹⁴

230. Januari 1976, Camat Mateus Ximenes memerintahkan penahanan terhadap Cipriano Magno Ximenes, yang baru saja menyerah di Soba (Laga, Baucau).

Sesudah penahanan itu, ia diserahkan kepada satuan Marinir. Dua hari kemudian istri dan anak perempuannya menyusulnya dalam tahanan. Ketiga-tiganya dipukuli oleh istri dan anak perempuan pemimpin UDT setempat. Tiga hari kemudian Cipriano Magno Ximenes dibunuh.²¹⁵

231. Pada 1978 sesudah keluarganya menyerah di Uatulari (Viqueque), anak deponen, Afonso, ditangkap Hansip dan dibawa ke pos Batalion 202. Ia dipukuli begitu hebatnya oleh Hansip dan ABRI, sehingga meskipun diperbolehkan pulang, ia meninggal akibat luka-luka yang dideritanya.²¹⁶

232. Tahun 1979 empat orang menyerah kepada Batalion 202 di daerah Gunung Matebian. Mereka dibawa ke Viqueque, tempat Hansip menendangi dan memukuli mereka dengan popor senjata. Satu dari empat orang itu meninggal seminggu sesudah penganiayaan tersebut. Deponen mengatakan, selama masa penahanannya di Viqueque, dua orang tahanan lainnya, Mário Harec dan Julio Soares, juga mengalami pemukulan hebat semacam itu dari komandan Hansip M313 dan mereka meninggal karenanya.²¹⁷

“Ia pergi sekolah...”

Dalam jangka waktu beberapa tahun dan di banyak distrik, para personel ABRI menggunakan sekumpulan istilah baku untuk menyebut pembunuhan atau penghilangan terhadap korban-korban mereka. Orang yang diambil untuk dieksekusi atau yang telah hilang, dikatakan telah “pergi mandi”, “pergi ke Jakarta/Bali/Quelical”, “pergi berburu”, atau “pergi beroperasi”. Namun, dari semua istilah itu, yang paling lazim digunakan oleh ABRI dan orang-orang Timor-Leste kakitangannya untuk menjelaskan tentang penghilangan adalah istilah yang mengatakan bahwa korban “pergi sekolah”.²¹⁸ Kasus tentang orang-orang yang “dikirim ke sekolah” dilaporkan kepada Komisi dari distrik-distrik Aileu, Ainaro, Baucau, Dili, Lautém, dan Manufahi. Contoh laporan paling awal tentang seseorang yang “dikirim ke sekolah” terjadi di Ainaro pada 1976.²¹⁹ Istilah ini juga dipakai dalam konteks penghilangan yang terjadi menyusul penyerangan Falintil atas Dili dalam Juni 1980, dan penghilangan yang mengiringi Operasi Persatuan dalam 1983 – 1984.²²⁰ Tapi jumlah terbesar kasus orang “pergi bersekolah” yang dilaporkan kepada Komisi terjadi pada 1978 – 1979. Dalam pandangan Komisi, penggunaan eufemisme ini dan berbagai eufemisme lainnya secara luas dan berulang-ulang menjadi bukti bahwa militer Indonesia dan pasukan pembantunya membunuh korban-korbannya sesuai dengan prosedur baku operasi yang berasal dari rantai komando dari atas.

Dalam banyak kasus dari periode 1978 – 1979, para pemimpin Fretilin dan komandan Falintil yang tertangkap atau menyerahlah yang “dikirim ke sekolah”.

Pada Maret 1979, dalam satu dari beberapa kasus penghilangan yang melibatkan mantan pemimpin Fretilin atau komandan Falintil, yang dilaporkan dari Manufahi pada sekitar waktu ini,^{*} enam orang pemimpin Fretilin yang menyerah di Betano (Same, Manufahi), bersama sekelompok besar orang pada November sebelumnya dipekerjakan untuk pembangunan jalan-jalan. Segera sesudahnya, keenam orang itu—José da Conceição, Francisco da Conceição, Franco da Costa, Paulino Teli, Martinho Aulaku, dan Sebastião Nunes—dipanggil oleh dua pejabat setempat orang Timor-Leste, yang mengatakan bahwa mereka semua, kecuali seorang, akan “dikirim ke sekolah”. Sejak itu lima orang tidak lagi terlihat. Orang keenam, yaitu José da Conceição, dipaksa menjadi anggota Hansip.²²¹

Tiga anggota terkemuka gerakan Resistansi di sektor Tengah Utara, yaitu Domingos Damião, seorang komandan kompi Falintil; Anacleto Mendonça, komandan Falintil lainnya; dan Antonio Sarmiento, seorang *delegado*, menyerah pada 1978 dan direkrut sebagai Hansip. Pada Maret atau April 1979, ketika Hansip setempat sedang berbaris di markas RTP 6 dan RTP 8 di Kota Aileu, ketiga orang tersebut dipanggil dan diberitahu agar pergi ke rumah Komandan Kodim (Dandim). Ketiga orang itu terakhir terlihat pergi dalam satu konvoi jip tentara Indonesia. Pada hari berikut, seorang kapten tentara Indonesia datang ke rumah Antonio Sarmiento dan mengembalikan arloji serta cincin perkawinannya. Kapten itu mengatakan para korban “sedang bersekolah”. Pada hari yang sama istri Anacleto Mendonça juga mendapat kunjungan dari seorang kapten. Ia juga memberikan kepada sang istri arloji dan cincin Anacleto Mendonça. Namun penjelasannya berbeda tentang di mana Anacleto berada. Ia mengatakan Anacleto telah “pergi berperang” di timur.²²²

Di Parlamento (Moro, Lautém) delapan orang Hansip—Horacio Silveiro Lopes, Amaro Amaral, Inácio dos Santos, Venancio Gusmão, Rodolfo da Costa Junior, Sebastião Maria Lourdes Oliveira, Justino dos Santos, dan Domingos Dias dos Santos—dipanggil ke Koramil pada 14 Mei 1979, karena dicurigai berhubungan dengan seorang komandan Falintil. Tujuh dari mereka itu kemudian terlihat dibawa pergi oleh tentara dari Batalion 745. Hanya seorang saja yang kembali. Kepada keluarga orang-orang yang hilang itu berulang-ulang dikatakan bahwa mereka sedang “pergi bersekolah”. Beberapa orang deponen mengatakan, mereka akhirnya tahu bahwa

* Lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 3429 dan 3401 dan CAVR, Profil Komunitas, Debu-Waen, Desa Ma-haquidan, Subdistrik Alas, Distrik Manufahi.

saudara-saudara mereka telah dibunuh di dekat markas Batalion 745 di Assalaino (Fuiloro, Lospalos, Lautém) dan Sepelata (Bauro, Lospalos, Lautém). Belakangan dua mayat korban ditemukan di Assalaino, dan satu mayat lagi di Sepelata.²²³

Kadang-kadang ketika keluarga mengetahui bahwa saudaranya telah “dikirim ke sekolah”, mereka seketika itu menyimpulkan bahwa ia telah dibunuh. Masalah ini menjadi sangat jelas, misalnya, karena korban yang dikatakan telah “dikirim bersekolah ke Jakarta” itu seorang yang butahuruf.²²⁴ Dalam contoh-contoh lain, ketika, misalnya, anggota keluarga diberitahu bahwa korban dikirim untuk mengikuti kursus Pancasila, ideologi negara Indonesia yang wajib bagi pegawai negeri sipil Indonesia, mula-mula penjelasan demikian mungkin agak meyakinkan, dan hanya dengan berjalannya waktu anggota keluarga akan mengerti arti yang sebenarnya dari apa yang telah diberitahukan kepada mereka.[†]

Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa terhadap para penduduk sipil dan petempur yang menyerah dan tertangkap

233. Sepanjang 1976 – 1979, ratusan ribu penduduk Timor-Leste turun gunung atau keluar hutan dan menyerah. Penyerahan itu terjadi terus-menerus sepanjang 1976 dan 1977 dan meningkat pada 1978. Dalam paruh kedua 1978, penyerahan mencapai puncaknya, yaitu ketika pasukan Indonesia menguasai basis-basis Resistansi terakhir (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik). Saat menyerahkan diri, para penduduk sipil akan melalui proses seleksi untuk menetapkan apakah mereka anggota Fretilin atau Falintil, dan jika benar demikian, apakah mereka menduduki posisi penting. Eksekusi dan penghilangan biasanya merupakan hasil proses itu. Anggota Fretilin yang terkenal, penduduk yang dicurigai mempunyai kegiatan klandestin, dan petempur yang menyerahkan diri adalah korban yang paling lazim. Pembunuhan dan penghilangan mencapai intensitas tertingginya pada paruh pertama 1978, beberapa bulan sesudah penyerahan diri secara massal pada akhir 1978, dan dalam masa sekitar berakhirnya Operasi Seroja pada akhir Maret 1979.[‡]

* Lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 03401, yang mengungkapkan bahwa, ketika saksi diberitahu anak perempuannya telah “dikirim ke sekolah”, ia segera mengerti bahwa anaknya telah dibunuh.

† Lihat Pernyataan HRVD 05365, 05369, 05376, dan 05364. MPR mengesahkan kursus ini, yang terkenal sebagai P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), dalam Tap MPR No. II/ MPR/1978.

‡ Pada 26 Maret 1979 komando operasi khusus, Komando Tugas Gabungan Seroja (Kogasgab Seroja), dihapus dan kegiatan operasional militer di Timor-Leste ditempatkan di bawah Komando Resort Militer (Korem) yang baru dibentuk dan dinamai Korem 164/Wira Dharma, yang ada di puncak struktur teritorial dan meluas ke bawah sampai ke tingkat desa. Perubahan ini membawa struktur militer Indonesia di Timor-Leste lebih sejalan dengan struktur di Indonesia sendiri, dimaksud untuk menengarai bahwa Resistansi telah dikalahkan, dan bahwa Timor-Leste telah menjadi provinsi biasa Indonesia paragraf 4 - 63 [lihat Bagian 4: Rezim Pendudukan, bagian tentang “Angkatan Bersenjata Indonesia dan Peranannya di Timor-Leste”].

Pembunuhan dan penghilangan di dalam tahanan militer sesudah penyerahan diri atau penangkapan

234. Banyak pembunuhan terhadap penduduk sipil yang menyerahkan diri jelas-jelas merupakan kasus eksekusi segera.²²⁵ Misalnya:

- Pada 1976, seorang anggota Falintil, Loe-Sili, ditangkap oleh lima orang Pasukan Khusus Indonesia di Mabil-Loa, Saburai (Maliana, Bobonaro). Segera sesudah menangkap dan menginterogasi, pasukan itu membunuhnya.²²⁶
- Seorang anggota Fretilin, Dasbere, ditangkap pada 5 Mei 1976 oleh pasukan dari Batalion 403 di Leimea Leten (Atsabe, Ermera). Ia dibawa ke Clikata. Tentara Indonesia itu menyuruhnya berpose dengan bendera Portugis, lalu mengambil gambarnya. Mereka kemudian membunuhnya.²²⁷
- Pada 9 Desember 1976 empat orang prajurit Indonesia menangkap Raimundo Pereira dan Berleto Moniz di Matai (Kota Suai, Covalima), sesudah seorang anggota partai Apodeti memberitahu bahwa mereka anggota Fretilin. Kedua orang itu dibawa ke Tua-Laran dan dibunuh.²²⁸
- Pada 1978 seorang perempuan bernama Guilhermina ditangkap oleh tentara dari Batalion 503 di Leorema (Bazartete, Liquiça). Mereka menemukan kartu OPMT (organisasi perempuan Fretilin, Organização Popular da Mulher Timorese) miliknya. Ia seketika itu dieksekusi.²²⁹
- Pada 1978 seorang ayah dan anak laki-lakinya, Uatu Suu dan Kenawatu, ditangkap oleh Hansip di Nabolu, Uaioli (Venilale, Baucau), dipimpin oleh M314. Mereka lalu dibunuh dan mayat mereka ditinggalkan di tempat mereka rebah. Anak laki-laki Uatu Suu yang berumur tujuh tahun, yang menyaksikan pembunuhan itu, dibawa pergi oleh dua orang Hansip dan tinggal bersama mereka di Ossu (Viqueque) sampai 1995, ketika saudara-saudaranya datang menjemputnya kembali ke Venilale.²³⁰

235. Pada 1978, ketika serangan Indonesia terhadap gerakan Resistansi mencapai puncaknya, kelompok-kelompok penduduk sipil menjadi sasaran serangan, baik ketika mereka hendak mencari jalan menyerah maupun ketika mereka berusaha bertahan di hutan. Dua laporan dari Subdistrik Natarbora di Manatuto menggambarkan dilema yang dihadapi penduduk saat itu:

- Di Natarbora pada 1978, ketika banyak penduduk menyerahkan diri, seorang rohaniwan, Pater Carlos, minta pada sekelompok penduduk sipil yang sudah menyerah supaya kembali ke hutan dan membawa keluar orang-orang yang sakit parah agar bisa mendapat perawatan. Ketika kelompok itu keluar dari hutan, mereka diserang oleh satuan Kopassandha. Salah seorang di antaranya, César Gonçalves, tewas dalam serangan itu.²³¹
- November 1978 pasukan Indonesia membawa Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, dengan pesawat terbang ke Natarbora, untuk meyakinkan rakyat yang masih bertahan di sana agar menyerahkan diri. Sebagai hasil seruan Xavier do Amaral ini banyak penduduk memang menyerahkan diri, tetapi ada juga yang tidak mau menyerah. Karena pihak Indonesia tahu

bahwa masih ada orang-orang yang tidak mau menyerah, mereka membakar semak belukar dan banyak orang mati terbakar.²³²

236. Pada 18 November 1978 pasukan dari satuan marinir, Pasmar 9, dan anggota-anggota Hansip menangkap delapan orang penduduk sipil dan membawa mereka ke markas polisi militer di Desa Laga (Baucau). Selama satu setengah bulan ditahan di sana, mereka diinterogasi dan mengalami berbagai macam siksaan, termasuk dicekik dan disetrum pada kemaluan mereka. Tiga orang di antara mereka itu, Naunoto, Domingos, dan Nokorika, dibawa pergi oleh para polisi militer dan hilang.²³³

237. Pada 16 Desember 1978 João Pereira ditangkap di Buibau (Baucau, Baucau) dan ditahan di markas RTP 18 (Resimen Tim Pertempuran), yang terletak di Buibau. Selama itu ia terus dipukuli. Pada 21 Desember seorang anggota Kodim Baucau datang ke markas RTP, mengambil deponen dan lima orang tahanan lainnya, dan memukuli mereka. Seorang komandan Hansip bernama M315 membawa dua tahanan, Mateus Ximenes dan Ernesto Ximenes, ke Sungai Wesele dan menembak mati mereka. Empat tahanan lainnya kemudian diizinkan pulang ke rumah masing-masing.²³⁴

238. Orang yang baru saja menyerah atau ditangkap juga mati dalam tahanan akibat penyiksaan dan penganiayaan selama interogasi.

239. Segera setelah Celestino Pinto dan istrinya turun dari Gunung Matebian pada 1978, ia ditangkap di Kota Uatulari (Viqueque) oleh pasukan Kopassandha dan Hansip, karena dicurigai menjalin hubungan dengan dua anggota Falintil, Antonio dan Jorgé. Para interogator memukuli dan menendangnya sepanjang hari karena mereka berusaha mengorek informasi tentang dua anggota Falintil itu. Pada hari berikut ia tewas karena luka-lukanya.²³⁵

Pembunuhan massal terhadap penduduk sipil yang tertangkap di Turiscai

Felismina Soares adalah satu-satunya saksi hidup atas pembunuhan massal terhadap 13 orang dari Turiscai (Manufahi) pada 22 Februari 1979.

Korban tinggal bersama banyak orang di suatu tempat bernama Sabailolo di Desa Foholau, sesudah mereka melarikan diri dari rumah masing-masing di Subdistrik Turiscai, ketika tentara Indonesia mendekati kota tersebut pada Februari 1976.²³⁶ Pada 22 Februari 1979, satu tim Hansip setempat di bawah pimpinan M316 mengepung sekitar 30 orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak di Sabailolo, dan segera membawa mereka kembali ke kota Turiscai. Ketika rombongan tiba di sebuah sungai di dekat Sabailolo, M316 memerintahkan anakbuahnya agar menggeledah 13 laki-laki dalam rombongan itu. Kemudian mereka itu dipisahkan dari para perempuan.

Sebelas dari ketigabelas orang itu dibawa ke jurang di arah hulu sungai. Felismina Soares hanya ingat delapan nama dari kesebelas orang itu yaitu: Beremali, Ta Mali, Bere Leki, Mau Leki, Mau Leki, Maubere, Maubere, dan Maubere lagi. Ia mengaku tidak mengingat lagi nama tiga orang yang lain. M316 memerintahkan tiga anakbuahnya menembak mati kesebelas orang itu dan membuang mayat mereka ke jurang. Kemudian, karena sudah mulai gelap, Hansip dan mereka yang masih hidup tidur di tempat pembunuhan tersebut. Pada hari berikut M316 memerintahkan mereka yang masih hidup meneruskan perjalanan menuju Turiscai. Dalam perjalanan itu ia mengeledah dua laki-laki yang tersisa, mantan kepala desa, Liurai Sebastião, dan saudara laki-lakinya, lalu mengambil harta milik mereka. M316 lalu memerintahkan menembak mati dua laki-laki itu. Mayat mereka ditinggalkan begitu saja. M316 sekarang masih hidup di Timor-Leste.²³⁷

Pembunuhan bersasaran terhadap orang yang dicurigai sebagai anggota dan pimpinan Fretilin/Falintil, sesudah penyerahan diri atau penangkapan

240. Ada pola yang jelas pada ABRI yang ditujukan pada mereka yang dicurigai sebagai mantan anggota Fretilin di tengah-tengah penduduk sipil yang menyerahkan diri. Komisi mendengar sejumlah kasus eksekusi terhadap penduduk sipil yang dicurigai sebagai anggota atau punya hubungan dengan Fretilin.²³⁸

241. Terkadang mereka yang dibunuh itu sudah tinggal beberapa waktu lamanya di dalam kekuasaan Indonesia tetapi dicurigai, mungkin karena ditemukan hubungan mereka dengan Fretilin:

- Maret 1976 para anggota Hansip menangkap seorang laki-laki bernama Maukei di Suro Kraik (Ainaro, Ainaro), dan menahannya di Leolima (Hato-Udo, Ainaro). April 1976 ia dibawa ke Luro di Leolima. Di sana ia, bersama empat orang lainnya dari Suro Kraik, dibunuh oleh enam anggota Hansip, menurut laporan atas perintah Camat Hato-Udo, M316, dan pasukan Batalion 327 yang ketika itu bertugas di Hato-Udo. Maukei ditahan dan dibunuh karena ia *delegado* Fretilin, dan dicurigai memberi bantuan kepada Fretilin di hutan, dan dengan demikian “bermuka dua”.²³⁹
- Pada 20 September 1978, Umberto Xavier, mantan *delegado* Fretilin, dan istrinya, Bicolo, seorang anggota Fretilin, dibunuh Hansip di Gourema, Fatukero (Railaco, Ermera), sesudah mereka ditangkap oleh tentara Indonesia.²⁴⁰ Pada 1979 satu peleton Hansip memukuli dan menyiksa tujuh anggota dari suatu keluarga yang telah mereka tangkap karena diketahui sebagai simpatisan Fretilin. Beberapa di antara mereka mengalami pemukulan sangat parah sehingga menderita cedera seperti geraham retak dan luka gawat pada kepala. Seorang dari mereka, Artur Mendonça,

meninggal karena luka-lukanya. Seorang yang lain, Orlando Mendonça, dibawa ke Maubisse (Ainaro), dan dibunuh di sana.²⁴¹

242. Orang yang dicurigai sebagai anggota Fretilin/Falintil dapat segera dibunuh sesudah menyerah atau tertangkap.²⁴² Luis Pereira menceritakan pola pembunuhan bersasaran pada Falintil di Manatuto:

Jika Fretilin bersenjata [Falintil] yang menyerah, [mereka] tidak akan menjalani proses biasa, tetapi akan ditangani secara khusus. Mereka semua diinterogasi oleh intel [intelijen militer], sebuah tim investigasi militer yang datang dari Manatuto. Jelas, semua keputusan tentang nasib tawanan diambil secara intern oleh militer. Sering kali Fretilin [Falintil] itu diizinkan pulang ke rumah. Tetapi bisa saja, satu atau dua bulan kemudian mereka akan dijemput dari rumah untuk dibunuh. Tonsus [peleton khusus], atau orang lain yang diperintahkan untuk menjemput mereka itu terus ke kantor Kopassus. Lalu setelah Kopassus mengambil keputusan, mereka pasti dibunuh. Kalau dibunuh, orang itu pertama akan dikirim ke kantor kecamatan dalam keadaan tangan diikat ke belakang, lalu pembunuhan akan dilakukan oleh Tonsus. Yang berwewenang memerintahkan pembunuhan hanyalah Kopassus.²⁴³

243. Dasar untuk menganggap mereka sebagai anggota organisasi tersebut sering lemah. Dalam kasus-kasus yang dilaporkan kepada Komisi, kepemilikan atas sebuah buku sudah bisa dianggap sebagai bukti bahwa orang itu kader Fretilin, dan pemeriksaan pada kulit telapak tangan yang menebal dari orang yang menyerah merupakan cara yang biasa untuk menetapkan bahwa seseorang adalah pejuang Falintil. Dalam satu kasus, nama si tersangka sudah dipandang cukup oleh ABRI sebagai alasan untuk membunuhnya:

- João de Deus menceritakan ketika ia menyerah kepada Batalion 512 di Letefoho (Ermera) pada 1976, ia ditahan karena para tentara menemukan kartu partai Fretilin di sakunya. Ia ditahan bersama dua orang lainnya. Salah seorang dari mereka ialah Nicolau Rosa. Nicolau dibunuh karena bernama sama dengan nama pemimpin Fretilin, Nicolau Lobato.²⁴⁴
- Ketika sekelompok orang menyerah pada Batalion 312 di Haeconi (Baguia, Baucau), di Matebian Feto, Oktober 1978, pasukan penangkap itu memisahkan tiga orang dari kelompok itu, yaitu Luis Lopes, Basilio, dan Moises, karena mereka berambut panjang dan karenanya diduga sebagai pejuang Falintil. Mereka bertiga dibawa pergi dan sejak itu tidak pernah terlihat lagi.²⁴⁵
- Maret 1976 Armindo Gonçalves Martins dan Maria Fatima menyerah kepada Batalion 507 di Bonuk di Holbelis, Labarai (Suai, Covalima) bersama serombongan sekitar 500 orang penduduk sipil. Serdadu-serdadu Batalion itu mengira Armindo seorang pejuang Fretilin. Tentara memisahkannya dari rombongan dan membunuhnya.²⁴⁶

244. Satu hasil dari proses seleksi acak yang kasar ini adalah banyak pejuang Falintil biasa dan rakyat yang samasekali tidak ikut berjuang dieksekusi. Misalnya:

- Mau Buti dan Lelo Sea adalah prajurit Falintil yang menyerah pada 1978. Pada Februari mereka ditahan di Rotutu, Same, Manufahi atas perintah ABRI. Kemudian mereka dibawa pergi, dengan dalih diajak mencari makan. Tetapi ternyata mereka ditembak oleh dua orang Timor-Leste, salah seorang dari mereka itu kepala desa.²⁴⁷
- Agustus 1978 Antonio da Costa Gono, seorang pejuang Falintil, telah menyerah kepada ABRI di Manatuto. Kemudian, pada tengah malam, ia diambil oleh sekelompok tentara, termasuk tiga orang Timor-Leste anggota ABRI. Ia lalu dibawa ke pos polisi, ditahan di sana, dan disiksa. Dari sana ia dibawa ke markas tentara setempat, yang terletak di Hotel Asiceo, dan di sana ia hilang.²⁴⁸
- Juga pada Agustus 1978, seorang anggota Falintil bernama Kai Fonok menyerah bersama 31 penduduk dari pangkalan mereka di Hali Oan (Lacluta, Viqueque). Setelah tiga hari Kai Fonok dipanggil Hansip, diajak pergi bersama mereka ke hutan untuk mencari senjata yang ditinggalkan oleh Falintil. Di hutan, hansip-hansip itu menembaknya mati.²⁴⁹
- Pada 1979 sepasukan tentara dari Batalion 202, di Coleigo Uaida (Ossu, Viqueque), menangkap Jaco Reis, mantan komandan peleton Falintil, dan beberapa orang penduduk sipil, yaitu Naha Kai; adik laki-lakinya, Sigi Kai; Uatumau; dan seorang lain lagi yang tak dikenal namanya. Sesudah diinterogasi oleh komandan di Koramil Ossu, mereka ditahan di pos Batalion 202 dan tidak pernah terlihat lagi.²⁵⁰

245. Komisi menerima kesaksian dari beberapa sumber yang menunjukkan bahwa sesudah jatuhnya basis Resistansi di Gunung Matebian, banyak orang yang dicurigai sebagai bagian dari Fretilin atau Falintil dieksekusi.

- Pada 25 November 1978 tiga orang laki-laki, Pedro Alves Cabral, Laiara, dan José Ximenes, turun ke Umurafa di kaki Gunung Matebian di Quelicai, dan mereka ditangkap oleh anggota Batalion 312. Para tentara Indonesia itu menuduh mereka bertiga komunis, mengikat dan memukuli mereka dengan popor senjata. Para tentara itu berulang-ulang menendangi kepala Pedro Alves Cabral dan mencungkil matanya. Ketiga lelaki itu lalu dibariskan berjajar di bibir jurang dan ditembak mati.²⁵¹
- Ketika Luis Soares dos Santos turun dari Gunung Matebian dan menyerah bersama keluarganya di Atalari (Laga, Baucau) pada 1979, tentara Indonesia menemukan tas berisi dua granat miliknya. Mereka lalu membawanya ke pos tentara di Atalari untuk diinvestigasi. Ia diizinkan kembali ke “kamp penampungan”, tempat keluarganya tinggal. Beberapa hari kemudian diumumkan bahwa orang-orang yang tinggal di kamp penampungan boleh pulang ke rumah masing-masing. Namun, pada waktu itu juga, Luis Soares dos Santos dan tiga orang saudaranya yang dahulu di hutan bersama dengannya, diambil Hansip dan dibawa ke Baucau, supaya, kata para Hansip

itu, investigasi bisa diteruskan. Selang satu minggu kemudian tiga saudara itu pulang ke rumah, tetapi Luis tidak pernah kembali.²⁵²

- Desember 1979, Carolino Ximenes ditangkap di Gunung Matebian oleh tentara Indonesia dari Batalion 502, bersama 47 orang lainnya. Oleh tentara Indonesia, mereka semuanya dicurigai sebagai pejuang Fretilin. Padahal, menurut reponen, mereka sebenarnya penduduk sipil biasa. Kepada keluarga mereka diberitahukan bahwa orang-orang yang ditangkap itu akan disekolahkan dan akan pulang ke rumah setelah mereka selesai. Mereka tidak pernah muncul kembali.²⁵³
- Sesudah turun dari Gunung Matebian pada November 1978, penduduk Desa Afaloicai (Uatocarbau, Viqueque) disuruh berkumpul di lapangan oleh Batalion Infanteri 202. Para tentara Indonesia memilih 13 orang laki-laki yang tampak kuat, yang mereka katakan akan dipekerjakan sebagai TBO. Lalu ketigabelas orang itu dibawa ke bekas gedung pemerintah Portugis, di sana mereka diikat dan diinterogasi selama dua hari sambil disiksa dengan setrum listrik. Sementara itu lima orang Hansip diperintahkan menggali lubang kubur untuk ketigabelas orang tersebut, di sebuah tempat bernama Garaulu di Afaloicai. Dua hari sesudah mereka diambil untuk interogasi, ketigabelas orang tersebut dibawa ke Garaulu dan ditembak mati oleh serdadu-serdadu dari Batalion 502. Lima orang Hansip hadir dalam eksekusi dan sesudah eksekusi itu selesai, mereka disuruh mengubur ketigabelas mayat itu. Menurut seorang informan, yang merupakan anggota Hansip di Uato Carbau pada saat eksekusi dilakukan, tetapi dahulunya komandan Falintil yang mengepalai ketigabelas korban tersebut, mereka adalah anggota pasukan Falintil biasa.
- Satu minggu kemudian Komandan Batalion 502 memerintahkan para Hansip untuk menggali dua lubang kubur lagi di Garaulu. Dua orang laki-laki, Carlos dari *aldeia* Irabin Leten di Uato Carbau dan Armino dari Baguia (Baucau), yang dicurigai menjalin hubungan dengan gerilyawan, Mereka dieksekusi di depan Wakil Komandan Koramil, M318. Komisi menerima laporan tentang tujuh orang laki-laki lagi yang dibunuh di Uato Carbau dalam Desember 1978 oleh pasukan dari Batalion 502, tidak lama sesudah mereka menyerah. Setidaknya-tidaknya tiga orang di antara mereka—Borloi, Gaspar Asukai, dan Belarmino Maunaha, semuanya dari Desa Bahatata di Uato Carbau—rupa-rupanya juga menjadi sasaran pembunuhan atas dasar penampilan fisik mereka yang kuat.²⁵⁴
- Komisi menerima berbagai pernyataan yang mengaitkan setiap satuan militer yang ikut serta dalam penyerangan terhadap Matebian dengan pembunuhan atau penghilangan penduduk sipil atau petempur yang berada di luar pertempuran, selama periode sekitar jatuhnya basis Matebian itu.²⁵⁵ Pada bulan-bulan sesudah penyerahan massal di Gunung Matebian, beberapa dari batalion-batalion itu, termasuk terutama Batalion 721, 202, 502, dan 745, menjadi pelaku langsung dari eksekusi massal terhadap orang-orang yang dihubungkan dengan Fretilin dan Falintil, yang terjadi pada awal dan pertengahan 1979 di Baucau, Viqueque, Lautém, dan Manatuto (lihat di bawah, bagian 3.5: Pembunuhan sesudah jatuhnya *bases de apoio*).

246. Misalnya, sejumlah pernyataan yang diterima oleh Komisi melaporkan tentang hilangnya orang-orang yang dibawa ke markas Batalion 202 di Uaida, Ossu De Cima (Ossu, Viqueque). Pada 1979, tidak lama sesudah menyerahkan diri di Uatolari dan kemudian dipindahkan ke kota Ossu, Afonso da Silva pergi ke kampung asalnya di Nahareka (Ossu, Viqueque), untuk mencari makan guna membebaskan keluarganya dari kelaparan. Di sana kebetulan ia berjumpa dengan seorang komandan Falintil yang bernama Rosito, seorang teman lamanya. Ia terlihat berpelukan dan bercakap-cakap dengan Rosito, dan oleh dua orang yang melihatnya melaporkan hal tersebut kepada Batalion 202 di kota. Setibanya di kota, Afonso da Silva ditangkap dan dibawa ke markas batalion di Uaida (Ossu). Sejak itu istrinya tidak pernah mendengar apa pun tentang nasib suaminya itu.²⁵⁶

Pembunuhan sesudah jatuhnya *bases de apoio*

247. Komisi menerima banyak kesaksian yang menggambarkan pembunuhan sistematis terhadap para pemimpin Fretilin dan para komandan Falintil. Komisi menerima bukti yang menunjukkan bahwa pembunuhan bersasaran itu terjadi setiap tahun selama masa 1976 – 1979. Namun, jumlah terbanyak dari kategori pembunuhan ini dilaporkan terjadi pada 1978 – 1979. Terkonsentrasinya pembunuhan terhadap pimpinan Fretilin dan para komandan Falintil pada paruh pertama 1979, dan bahkan bertahun-tahun setelah banyak di antara mereka menyerahkan diri atau tertangkap, serta sifat meluasnya pembunuhan tersebut memperlihatkan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan secara sistematis dan merupakan hasil keputusan tingkat tinggi untuk mencegah kebangkitan kembali gerakan Resistansi dengan membasmi pemimpin mereka yang masih hidup.

248. Kata-kata seorang tawanan di Baucau melukiskan suasana ketakutan yang tak kunjung reda ketika itu:

Topik yang lazim dalam percakapan sehari-hari berkisar pada kejahatan: dua orang lagi sudah dibunuh; si ini dan si itu dipanggil oleh Kotis [Komando Taktis] atau oleh RTP [Resimen Tim Tempur] untuk diinterogasi; si ini dan si itu disiksa di Flamboyan; si anu sudah hilang; dan sebagainya.²⁵⁷

249. Sifat sistematis dari operasi ini sangat jelas bukan saja bagi para tawanan, tetapi juga untuk masyarakat luas, menyebarkan ketakutan bahkan di tempat-tempat seperti Suai, di mana para pejuang dan aktivis yang menyerah atau ditangkap tidak hilang, tetapi dikhawatirkan akan hilang.²⁵⁸

250. Pada 1977, Presiden Soeharto menjanjikan amnesti kepada semua pejuang Fretilin, menawarkan jaminan keamanan kepada mereka apabila mereka menyerahkan diri. Banyak pemimpin Fretilin dan Falintil yang merundingkan syarat-syarat penyerahan diri dengan militer Indonesia dan para pejabat pemerintah sipil Timor-Leste, mencantumkan jaminan yang sama bagi mereka sendiri dan penduduk sipil yang menyerahkan diri bersama mereka. Baik amnesti presiden maupun persetujuan di kalangan rakyat biasa itu secara sistematis dilanggar.

251. Pada Agustus atau September 1978, Asisten Fretilin, Merita Alves, ketika itu ditahan di Dili, menerima surat dalam bahasa Inggris dari Alarico Fernandes, dengan tajuk “Sky Light”. Surat itu melukiskan rencana perundingan dengan pihak intelijen Indonesia tentang penyerahan diri rekan-rekan dan para pengikutnya yang masih di hutan. Walaupun Alarico Fernandes sendiri selamat, namun banyak lainnya dari kelompok “Sky Light” tidak selamat. Sebastiao Montalvao (Lais), Afonso Redentor, Antonio Pinheiro (Botemau), Amadeo de Coelho (Surik), dan Joao Bosco Galucho Soares adalah nama-nama di antara mereka yang hilang. Sesudah menyerah Sebastiao Montalvao diduga telah diangkut dengan helikopter ke Remexio (Aileu) dan dieksekusi di sana.²⁵⁹

252. Walaupun banyak mantan pimpinan Resistansi yang hilang atau dieksekusi sesudah mereka ditangkap atau menyerah, ditahan dalam waktu panjang untuk kepentingan pemeriksaan, dan bahkan dibebaskan dari tahanan sebelum hilang atau dieksekusi; yang lain lagi, antara lain Anatonio Carvarino (Mau Lear), Hamis Basarewan (Hata), Herminegildo Alves, dan Cesar Mau Laka, dilaporkan segera dibunuh sesudah masuk tahanan militer Indonesia; sementara yang lainnya lagi, seperti Bi Lear (Maria do Ceu Carvarinho) dilaporkan hilang suatu saat sesudah menyerahkan diri, tetapi tanpa pernah masuk sistem penahanan. (Lihat Bab 7.4: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa.)

253. César Mau Laka, anggota Komite Sentral Fretilin dan Komisaris Politik untuk Sektor Depan bagian Selatan, ditangkap pasukan ABRI di Manuwén, suatu daerah antara Natarbora dengan Manatuto pada November 1978. Ia dibawa ke Dilor (Viqueque), tempat ia ditahan dan diinterogasi oleh militer selama beberapa hari. Sepanjang waktu itu ia disiksa dan diancam untuk dibunuh. Kemudian seorang perwira senior ABRI bernama Soetarto (kemungkinan Brigjen Damianus Soetarto, ketika itu Komandan Operasi Keamanan [Koopskam] untuk Timor-Timur), datang dengan helikopter dan berbicara dengan César. Soetarto mendesak César untuk bekerjasama dan memberitahu letak basis-basis Fretilin dan Falintil. César menolak bicara. Soetarto terbang meninggalkannya. Malam itu César Mau Laka diambil dan tidak pernah muncul kembali.²⁶⁰

254. Bi Lear (Maria do Ceu Carvarinho) adalah *assistente* Fretilin dan penasihat politik untuk CPN (Komisi Politik Nasional). Pada Februari 1979 suaminya, Mau Lear, Wakil Ketua Fretilin, ditangkap di dekat Manatuto. Segera sesudah itu Bi Lear berusaha merundingkan penyerahan dirinya di kamp konsentrasi dekat Ostico (Baucau, Baucau), tempat banyak pemimpin Fretilin lainnya telah menyerah.²⁶¹ Seorang rohaniwan, Pater Locatelli, bertindak selaku perantara untuk penyerahan Bi Lear dan ia kemudian dibawa ke Venilale (Baucau), dan di sana ia tinggal di rumah seorang kolaborator Timor-Leste, serta diawasi oleh polisi militer sampai April. Selama masa itu ia dikunjungi dua kali oleh Danrem (Komandan Korem) Timor-Timur, Kolonel Adolf Sahala Rajaguguk. Maksud kunjungan ini tidak diketahui, tapi mungkin untuk menekan Bi Lear agar menjalin kontak dengan para anggota Resistansi yang masih bertahan. Suatu saat sesudah ini Bi Lear dibawa pergi dan hilang.²⁶²

255. Bagian ini memusatkan perhatiannya pada akibat operasi eksekusi dan penghilangan yang terkoordinasi pada 1979 di Dili, Baucau, Lautém, Manufahi, dan Viqueque. Operasi ini melebar ke wilayah-wilayah lainnya, termasuk Aileu (lihat Box: “Ia pergi sekolah”, setelah paragraf 232, atas) dan Manatuto (lihat Tabel Pembunuhan di Distrik Manatuto, Februari – April 1979, setelah paragraf 335 di bawah), di mana dikembangkan lagi pola yang menjadikan orang-orang yang pernah aktif di Fretilin dan Falintil sebagai sasaran, termasuk banyak dari mereka yang telah direkrut di dalam institusi-institusi semacam Hansip.

Dili

Tabel 12: Orang-orang yang dilaporkan telah berada dalam tahanan sebelum dihilangkan/dibunuh

| | Jabatan | Tanggal pembunuhan/ penghilangan | Tempat pembunuhan/ penghilangan | Sumber |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Adão Cristovão | Tonsus | | | |
| Agostinho Tilman | | | | |
| Alito Alves | | | | |
| Anibal Araújo | CCF | | | |
| Antonio Carvarino (Mau Lear) | CCF | | | |
| Antonio Policarpo | | | | |
| Cornelio Exposto | | | | |
| Domingos Ribeiro | Kepala Staf Falintil | | | |
| Duarte da Silva | | Apr-79 | Dili | |
| Filomeno Alves | | | | |
| Filomeno Exposto | | | | |
| Hamis Basarewan (Hata) | CCF | | | |
| Horacio Alves | | | | |
| Inacio Fonseca (Solán) | CCF | | | |
| Jacob Ximenes | | | | |
| João Baptista de Jesus | Komandan Sektor | | | |
| João Bosco Sarmiento Quintão | CCF | 14/4/79 | Dili | Pernyataan HRVD No 3759 |
| João Bosco Galucho Soares | CCF | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----|-----------|------|-------------------------|
| João da Conceição | CCF | 14/4/79 | Dili | |
| Maria Borges | | 8-Mar-79 | Dili | |
| Juvenal Inacio | CCF | | | |
| Leopoldo Joaquim | | | | |
| Manecas Exposto | | Apr-79 | Dili | |
| Maria Gorete Joaquim | | | | |
| Mateus Barbosa | | 8-Mar-79 | Dili | Pernyataan HRVD No 5775 |
| Mateus Siqueira | | 8-Mar-79 | Dili | |
| Moises Rafael Tilman | | 10-Apr-79 | Dili | |
| Olhada | | | Dili | |
| Onorio Pereira | | | | |
| Oscar Leopoldino Araújo | CCF | | | |
| Paulino Pereira | | | | |
| Paulo Mesquita | | | | |
| Paulo Rodrigues | CCF | | | |
| Sebastião Sarmiento | | | | |
| Sebastião Montalvão | | | | |
| Vitor Fernandes | | Mei-79 | Dili | |

Sumber: Pernyataan HRVD 3529, 3602, 3759, 5671, 8037, 8041, dan 8115.

256. Banyak pemimpin senior Fretilin dan para komandan Falintil dibawa ke Dili dan ditahan di Comarca (Balide, Dili), atau di pusat interogasi di Sang Tai Hoo.²⁶³ Sebagian besar dari mereka kemudian hilang, sekitar Maret - April 1979, termasuk beberapa orang yang dibebaskan dari tahanan sebelum ditahan kembali. Beberapa di antara mereka dilaporkan dibawa ke tempat-tempat eksekusi di dekat Dili, seperti di Tacitolu, di barat Dili, dan Areia Branca, di timur Dili. Tawanan lainnya dilaporkan dipindahkan ke pusat-pusat penahanan di luar Dili, sebelum mereka dieksekusi di tempat-tempat tak jauh dari situ.²⁶⁴

257. Merita Alves menyerah di Ilimano (Laclo, Manatuto) pada 20 Juli 1978. ABRI menduga ia istri seorang tokoh penting di hutan, karena ia tampak cukup makan dan sehat. Setelah ABRI menginterogasinya di pos mereka di Ilimano, mereka membawanya ke Dili pada 22 Juli, di mana ia bermalam di rumah seorang keluarga. Hari berikutnya ia dibawa oleh perwira-perwira intelijen ke pusat interogasi Sang Tai Hoo dan ditahan di sana sampai Desember 1978. Pada Januari 1979 ia dipindahkan ke pusat interogasi Kotis, di penjara Farol. Tahanan-tahanan lain di Sang Tai Hoo diperbolehkan pulang, tetapi harus melapor dua kali sehari ke Kotis.²⁶⁵ Pada Maret 1979 hampir semua tawanan yang sudah dilepas ditangkap kembali dan mereka serta orang-orang lain yang ditahan bersama Merita menjadi korban dari apa yang ia sebut 'penangkapan malam': mereka akan dibawa pergi dan hilang:

Tiap malam militer mengambil tahanan, yang kemudian hilang atau dibunuh. Operasi 'penangkapan malam' dimulai pada Maret 1978. Ketika itu barangsiapa yang mempunyai hubungan dengan Fretilin menghadapi risiko dibunuh atau dlenyapkan...Sesudah saya mengalami berbagai macam siksaan, saya dibebaskan bulan Agustus 1979. Semua teman lain di kelompok saya dibunuh.²⁶⁶

258. Selama masa ini tahanan-tahanan lain ditahan di Comarca, Balide, tetapi secara rutin dibawa ke Sang Tai Hoo dan kemudian ke Kotis di Farol untuk diinterogasi. Di antara tokoh-tokoh senior yang dilaporkan telah ditahan di Comarca dan kemudian hilang antara lain adalah João da Conceição, João Bosco Sarmento Quintão, Inacio Fonseca (Solan), dan Domingos Ribeiro. João da Conceição dan João Bosco Quintão dilaporkan telah dibawa dari Comarca pada Februari 1979 oleh pasukan Kopassandha dan tidak pernah tampak lagi. Domingos Ribeiro dilaporkan dikeluarkan dari Comarca pada malam hari 18 April 1979 dengan beberapa tahanan lainnya, termasuk Menecas Exposto dan Meno Alves, yang baru saja ditahan kembali. Mereka dipercaya telah dieksekusi di Areia Branca dan Tacitolu.²⁶⁷

259. Tahanan lain yang hilang dari Dili dilaporkan telah dibawa ke suatu tempat sebelum mereka dieksekusi. Solan, misalnya, dilaporkan diambil dari Comarca pada akhir Februari dan diduga telah dipindah ke markas RTP 16 di Baucau, sebelum dibawa ke Lacudala di Quelicai (Baucau) pada akhir April 1979 dan dieksekusi.²⁶⁸ Para tahanan lain yang dibebaskan sesudah suatu masa penahanan di Sang Tai Hoo dan kemudian ditangkap lagi, mungkin juga dibawa ke Baucau sebelum akhirnya dieksekusi di Lacudala, Lospalos (Lautém), atau Uatolari (Viqueque). Termasuk di antara mereka ialah Sera Key (Juvenal Inácio), Leopoldo Joaquim, Anibal Araújo, dan José Alcino João Baptista Soares de Jesus.

260. Maria de Fatima Vaz de Jesus, seorang pejabat OPMT, dan suaminya, João Baptista Soares de Jesus, Komandan Sektor Depan bagian Selatan, ditangkap di suatu tempat bernama Lobata di daerah Halic di Covalima pada 17 Mei 1978. Hanya sesudah melalui masa-masa penahanan di Bobonaro dan Liquiça barulah mereka dibawa ke Sang Tai Hoo di Dili, sekitar November 1978. Sesudah Sang Tai Hoo ditutup sebagai pusat interogasi, keduanya harus melapor setiap hari ke markas Kotis di Farol. Pada 19 Maret 1979 João Baptista Soares de Jesus hilang sesudah melapor ke Kotis.²⁶⁹

261. Kepada Komisi, Maria de Fatima Vaz de Jesus menceritakan:

Kapan saja saya menanyakan suamiku, TNI selalu memberi jawaban: "Mungkin ia kembali ke hutan lagi"...Kadang-kadang kami ingin melupakannya, tapi kami tidak bisa, karena hati kami masih terluka. Sangat sulit, karena kami masih belum tahu benar-benar di mana tulang-belulangnyanya. Di mana mereka membunuhnya dan menguburnya? Sering ketika anakku masih kecil, ia bertanya padaku: "Mengapa ibu tidak tanya kepada orang-orang besar itu, di mana ayah dibunuh? Di mana ia dikuburkan?" Ia masih anak kecil, tapi ia pun ingin tahu, dan itu tidak mudah.²⁷⁰

262. Komisi diberi nama orang-orang Indonesia yang bekerja di Sang Tai Hoo dan markas Kotis. Sang Tai Hoo dipimpin oleh Mayor Bambang dan pusat interogasi Kotis oleh Mayor Syamsun. Komandan atas seluruh Kotis dikenal sebagai Mayor Sunarto. Para interogator lain di dua tempat itu antara lain Mayor Sinaga, Mayor Ganap, Mayor Mukhdi, Kapten Ali Musa, Mayor Sitorus, Mayor Yani, Mayor Freddy, dan beberapa lainnya lagi, seperti Gunardi dan Aziz Hasyim yang pangkatnya tidak diketahui. Banyak dari para perwira ini dipercaya masih hidup dan bisa menceritakan apa yang telah terjadi pada para tawanan yang hilang selama dalam penahanan.

Hilangnya Luisa*

ABRI menggunakan tokoh-tokoh terkenal Resistansi untuk kepentingan propaganda, baik di Dili maupun di luar Dili. Beberapa dari mereka dibiarkan tinggal di rumah tetapi biasa dipanggil ABRI untuk dipertontonkan di depan umum sebagai alat propaganda, atau dibawa dengan helikopter, melintasi daerah pedalaman dan mengimbuu mereka yang masih bertahan agar menyerah. Komisi mendengar bahwa kapan saja seseorang di antara mereka akan dibawa, ABRI mengatakan kepada keluarga mereka bahwa mereka akan dibawa “pesiar dengan mobil” ke Baucau. Biasanya mereka tidak kembali.²⁷¹

Luisa, seorang aktivis muda Unetim yang menjadi terkenal secara internasional sebagai lambang penderitaan perempuan Timor-Leste, menjelaskan dengan sangat bagus tentang kenyataan perlakuan semacam itu. Ia ditangkap pertama kali pada Desember 1975 ketika masih berumur 17 tahun, dan ditahan di Tropical Snack Bar dan kemudian di pusat interogasi Sang Tai Hoo.²⁷² Sejak itu sampai ia hilang pada hampir empat tahun kemudian, ia mengalami pelecehan terus-menerus oleh para anggota militer Indonesia, dan pada saat-saat tertentu selama ditahan ia menderita siksaan dan perkosaan.²⁷³ Selama masa ini ia digunakan oleh ABRI untuk tujuan propaganda. Dilaporkan ia juga digunakan secara seksual oleh beberapa komandan militer.²⁷⁴

Selama tahun-tahun ini ia berhasil menjalin kontak dengan teman-temannya di hutan. Tetapi ia berpikir bahwa tugasnya tetap ada di Dili. Namun pada 1978 tampaknya ia berubah pikiran: masa penahannya tampak akan berakhir dalam tahun itu, ketika terbongkar rencananya untuk melarikan diri dari Dili bersama sekelompok perempuan lain untuk menggabungkan diri dalam pasukan Resistansi di hutan.²⁷⁵ Pada Juli 1978 ia ada di Dili, ketika bertemu Merita Alves di Sang Tai Hoo dan memperlihatkan bekas-bekas luka yang diperolehnya akibat

* Bukan nama sebenarnya. Digunakan nama samaran untuk melindungi identitas korban.

penganiayaan bertahun-tahun. Sejak saat itu Luisa tidak lagi ditahan, tetapi secara teratur harus melapor ke Sang Tai Hoo. Suatu waktu pada 1979 ia pindah ke Baucau, tempat ia hidup dalam keadaan setengah-bebas serupa di Dili, tinggal bersama satu keluarga setempat setidaknya selama beberapa saat, dan bahkan dilaporkan bekerjasama dengan sebuah jaringan klandestin. Namun pada saat-saat tertentu ia juga harus melapor kepada pusat interogasi Flamboyon dan melakukan tugas-tugas propaganda bersama para perwira militer Indonesia. Dilaporkan kepada Komisi bahwa terakhir kali ia terlihat pada September 1979.²⁷⁶ Menurut Merita Alves, namanya tercantum dalam daftar orang-orang terpilih untuk dilenyapkan.²⁷⁷

Distrik Baucau

Tabel 13: Pembunuhan dan penghilangan di Quelicai 1978-79

| | Pekerjaan | Daerah asal | Tempat penyerahan diri/ penangkapan | Tanggal penyerahan diri/ penangkapan | Tanggal pembunuhan/ penghilangan | Tempat pembunuhan/ penghilangan | Pelaku (-pelaku) |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Abiro Guimarães | | | | | 5/1/1979 | Quelicai | |
| Afonso Cristovão | | | | | 5/1/1979 | Quelicai | |
| Albino Gusmão (Kiti Karson) | Mantan polisi militer | Maluro, Quelicai | Venilale | 11/1/1978 | 5/1/1979 | Quelicai | Armed 13 |
| Alcina Ximenes | | | Afaca, Quelicai | 14-4-79 | 4/1/1979 | Lacudala | Armed 13, Btn 321 dan Sukarelawan |
| Antonino Correia | | Seical, Baucau | Buruma, Baucau | 3/1/1979 | | Lacudala | RTP 18 |
| Antonino Varia | Wakil Komandan, Kompi I | | Abafala, Quelicai | 3/1/1979 | 3/1/1979 | Lacudala | Btn 315, Armed 13 |
| Antonio Espirito Santo | | | Afaloicai, Uatulari | 1979 | | Quelicai | |
| Aquilino de Oliveira Pinto (Eli Lau) | Kompi I, mantan guru | Buruma, Baucau | Abafala, Quelicai | 3/1/1979 | 3/1/1979 | Lacudala | RTP ? |
| Candido Felipe Neto Wemau | Kompi I, mantan guru | | Abafala, Quelicai | 3/1/1979 | 3/1/1979 | Lacudala | Flamboyon, RTP 18 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------|--|
| Celestino Belo | | | Afaca, Quelicai | 14-4-79 | 4/1/1979 | Lacudala | Armed 13, Btn 321 dan Sukarelawan |
| Celestino Pelay | Komandan | Laga | Ailemilari, Tequinaumata, Laga | 7/3/1979/4-79 | 21-3-79/5-79 | Lacudala | Camat Mateus, Hansip, Pasmar 8, Koramil Laga |
| Dara-Koo | | Laga | | 2/1/1979 | 6/1/1979 | Lacudala | "Polisi", Kades, Koramil |
| Dino Monteiro | | Ossu | | | 5/1/1979 | Lacudala | |
| Domingos Belo | | | Afaca, Quelicai | 14-4-79 | 4/1/1979 | Lacudala | Armed 13, Btn 321 dan Sukarelawan |
| Domingos Gaio | | | | | 5/1/1979 | Lacudala | Flamboyan, RTP 18 |
| Domingos Torres | Delegado Comissariado, mantan seminaris | Uato Carbau/ Uatulari? | Buruma | 11/1/1979 | May/Jun-79 | Lacudala | Flamboyan, RTP 18 |
| Domingos Ximenes | | | Afaca, Quelicai | 14-4-79 | 4/1/1979 | Lacudala | Armed 13, Btn 321 dan Sukarelawan |
| Du Dara | | | Letemumu, Quelicai | | | Lacudala | |
| Felix Ximenes | | Laga | | 2/1/1979 | 6/1/1979 | Lacudala | "Polisi", Kades, Koramil |
| Francisco | | | | 11/1/1978 | 11/1/1978 | Quelicai | |
| Francisco da Costa Correia | | | | 15-8-79 | | Quelicai | Kodim, Armed |
| Francisco Freitas | | Buibau, Baucau | | | 5/1/1979 | Quelicai | |
| Francisco Marques | Delegado Comissariado | | | | May-Jun-79 | Quelicai | |
| Gaspar Correia | Delegado Comissariado, Baucau | Seical | | | Apr- Jun 79 | Quelicai | RTP 16 |
| Gil Freitas | Komandan Tonsus | | | | 3/1/1979 | Lacudala | |
| Gregorio Pereira | | Afaca, Quelicai | | | May-Jun-79 | Lacudala | |
| Ignacia | | | | | 1979 | Quelicai | |
| Inacio Fonseca (Solan) | CCF, Adjunto | Tutuuala, Lautém | Ossu | 12/1/1978 | 4/29/1979 | Lacudala | |
| Jacinta Gaio | | | | | 5/13/1979 | Lacudala | |
| Jaime Cabral (Mau Leka) | | | | | awal 1979 | Lacudala | |
| Januario Braga | | | | | Mei-Juni-79 | Lacudala | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|----------|---|
| Januario Gaio | | Guruça, Quelical | | | 5/1/1979 | Lacudala | |
| Jeremias Soares | | Uatulari | | | 5/1/1979 | Lacudala | |
| João dari Baguia | | Baguia | | | Mei-Juni-79 | Lacudala | |
| João Branco | Komandan Tonsus | Lospalos | | 1976 | 3/1/1979 | Lacudala | Armed |
| João Meneses | | | Afaloicai, Uatulari | 1979 | Apr- Jun 79 | Quelical | |
| Joaquim Fraga (Au Lela) | | | | | Mei-Jun 1979 | Lacudala | |
| Joaquim Ximenes | | | Afaca, Quelical | 14-4-79 | 4/1/1979 | Lacudala | Armed 13, Btn 321 dan Sukarelawan |
| José Alcino | | | | | Mei-Jun 1979 | Lacudala | |
| José Gaio (Mau Seklai) | Assistente | Guruça, Quelical | Quelical | Nov-78? | 5/1/1979 | Lacudala | |
| José Ximenes | | Quelical | | Nov-78? | Mei-Jun 1979 | | |
| Laiara | | Quelical | | Nov-78? | Mei-Jun 1979 | | |
| Lino da Costa | | Ponta Leste | | | 6/1/1979 | Lacudala | |
| Lino Olocasa | Komandan Sektor | Uato Carbau | Quelical | 11/1/1978 | 1/1979 | Lacudala | Btn 315, Flamboyan, RTP 16 |
| Lourenço Gaio Ximenes | | Abafala, Quelical | | | 5/1/1979 | Lacudala | |
| Luisa Gaio | | | | | 5/13/1979 | Lacudala | |
| Manu Loi | | | | 11/1/1978 | 11/1/1978 | Lacudala | |
| Marçal Alcino | Assistente de Zona | | | | Mei-Juni 1979 | Quelical | |
| Marçal Braga | | Quelical | | | Mei-Juni 1979 | Quelical | |
| Mateus dos Santos | | | | | 5/1/1979 | Lacudala | Armed 13, Albino (Hansip) |
| Paulo Agapito Gama | Komandan | Laga | Ailemilari, Tequinaumata, Laga | 2-79/7/3/1979/ 4-79 | 21-3-79/5-79 | Lacudala | Camat Mateus, Hansip, Pasmal 8, Koramil Laga |
| Paulo Gaio | | Guruça, Quelical | | | 5/1/1979 | Lacudala | |
| Paulo Soares | | | | | Mei-Juni 1979 | Quelical | |
| Pedro Alves Cabral | | Quelical | | Nop-78? | 11/1/1978 | Quelical | |
| Rui Freitas | | | | | Mei-Juni 1979 | Quelical | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|---------------|----------|----------|---|
| Sebastião Alves | | | Afaloicai, Uatulari | 1979 | | | |
| Sidonio Sarmiento (Mau Anik) | Secretario, mantan guru | Laisorolai | | 11/1/1978 | 13-5-79 | Lacudala | Flamboyan, RTP 18, Armed 13 |
| Tadeo Freitas Muniz (Laicana) | Komandan Kompi I | | Abafala, Quelicai | Feb-79/Mar-79 | 5/1/1979 | Lacudala | Btn 315, (Fatumaca, rumah Aleixo Ximenes), RTP 16, Armed 13 |
| Virgilio Dias | Delegado Comissariado, Dili | Quelicai | | | 6/1/1979 | Lacudala | RTP 16 |

Sumber: Pernyataan-pernyataan HRVD 7800, 0572, 7682, 3908, 8051, 7712, 2127, 7760, 0595, 0597 dan 7787; Wawancara CAVR dengan Zeferino Armando Ximenes, Baucau, 13 Juni 2003; Constantino dos Santos, Letemumu (Quelicai, Baucau), 13 Juni 2003; José Correia (Calala), Tirilolo (Baucau, Baucau), 24 Maret 2004; Fernando José Freitas Soares dan Venancio dos Santos Alves, Quelicai, 2 Mei 2004; CRRN Communiqué, Juli 1983, Gatimor No 6, 1983; Profil Komunitas, Maluro, Quelicai.

263. Antara akhir 1978 sampai pertengahan 1979, ratusan orang dilaporkan dibunuh atau hilang di Distrik Baucau, dalam aneka macam keadaan: segera sesudah mereka menyerahkan diri, dalam eksekusi umum, saat mereka mencari makan, atau sedang dalam kegiatan sehari-hari mereka, dan dalam pos-pos serta markas militer serta tempat-tempat lain yang dipakai sebagai pusat penahanan di seluruh distrik itu.^{*} Pembunuhan yang paling terkenal terjadi di tempat-tempat eksekusi di Quelicai (Baucau), dalam masa antara April dan Juni 1979. Komisi mendapat nama 59 orang yang Komisi percaya telah dibunuh di berbagai tempat eksekusi di Quelicai, yang paling sering digunakan ialah suatu tempat bernama Lacudala.[†] Jumlah ini jauh di bawah jumlah keseluruhan, yang diberikan oleh sumber-sumber yang diwawancarai di Quelicai sendiri, yang diduga lebih daripada 300 orang telah dieksekusi di sana. Mereka mendasarkan perkiraan itu pada daftar yang pernah mereka lihat dan atas dasar tulang-belulang orang yang telah dibunuh dan kemudian dikumpulkan di sana.[‡] Lacudala ialah tempat eksekusi di mana tahanan dari berbagai daerah

* Tentang Pembunuhan Seketika, lihat Pernyataan HRVD 0536, 7069, 5729, 0538, 5395, 6802, 7781, 7761, 2127, 7758, 0521, 9188, 2127, 7087, 7778, 3072, dan 2362; tentang Penghilangan, lihat Pernyataan HRVD 7069, 6147, 3933, dan 7047; tentang pembunuhan sesudah ditahan di pos-pos dan markas militer, serta tempat-tempat yang dipakai sebagai pusat penahanan, lihat Pernyataan HRVD 3908, 7930, 7117, 0126, 7076, Profil Komunitas, Alawa Kraik (Bagaia, Baucau) dan Bahamori (Venilale, Baucau); tentang pembunuhan terhadap orang yang sedang mencari makan atau melakukan kegiatan mereka sehari-hari, lihat Pernyataan HRVD 3895, 0542, 0548, 6110, 3879, 7713, dan 7797.

† Lacudala bukan satu-satunya tempat eksekusi di daerah Quelicai. Tempat-tempat lain dilaporkan terletak di Samateku, Alaslai, Lawaliu, dan Lebenei [Wawancara CAVR dengan Constantino dos Santos, Letemumu (Quelicai, Baucau) 13 November 2003].

‡ Mayat korban eksekusi dilaporkan telah dibuang ke jurang-jurang yang ada di dekat tempat eksekusi. Eksekusi dikabarkan berhenti pada 1980, dengan datangnya Batalion 114 dari Aceh di Quelicai. Batalion 114 mengizinkan keluarga korban mengumpulkan tulang-belulang korban dan kemudian menguburkannya. [Wawancara CAVR, dengan Constantino dos Santos, Letemumu (Quelicai, Baucau) 13 November 2003; dan Leonel Guterres, Quelicai (Quelicai, Baucau), 13 November 2003].

dibawa ke sini untuk dieksekusi. Meskipun banyak di antara mereka yang dibunuh di Lacudala berasal dari Quelicai, juga terdapat korban yang berasal dari Lospalos (Lautém), Ossu, Uatolari, dan Uato Carbau (Viqueque), begitu pula dari bagian-bagian lain dari Distrik Baucau, termasuk Venilale, Laga, dan Baguia.²⁷⁸ Walaupun tidak semua, sebagian besar yang dibunuh di Quelicai adalah orang-orang yang menduduki posisi pemimpin dalam Fretilin atau Falintil.

264. Tentang banyaknya korban ditunjukkan oleh cerita-cerita berikut:

- Tadeo Freitas Muniz (Laicana) menyerah kepada Batalion 315 di Kotaisi, Abafala (Quelicai, Baucau) pada 7 Maret 1979 dengan satu kompi bersenjata lengkap. Penyerahan diri mereka, menurut laporan, telah dirundingkan dengan mantan anggota senior Fretilin dan Falintil yang sudah menyerah atau ditangkap lebih dulu dan kemudian bekerja di bawah perintah Kolonel Iswanto.²⁷⁹ Satu minggu kemudian ia dan wakilnya, Antonino Varia (Ria), dibawa ke Lacudala dan dieksekusi di sana. Beberapa orang dari pasukannya melarikan diri dan beberapa lainnya lagi direkrut ke dalam paramiliter Tim Saka.²⁸⁰
- João Branco, mantan anggota Komite Sentral Fretilin yang bersama orang-orang lainnya menyerah kepada pihak Indonesia di Lospalos pada 1976 dan kemudian diangkat mengepalai pasukan cadangan berkekuatan 200 orang yang dinamai Tonsus (Peleton Khusus), dan salah seorang wakilnya, Gil Freitas, dilaporkan telah dibunuh di Lacudala pada Maret 1979. Bersama pasukan Tonsusnya, João Branco ikut ambil bagian dalam penghancuran basis Falintil/Fretilin di Matebian. Duapuluh tujuh anakbuahnya dilaporkan dibunuh oleh pasukan Batalion 745 di Trisula (Lautém), dan beberapa lainnya lagi mungkin terbunuh di Lacudala pada Maret 1979 bersama João Branco dan Gil Freitas.²⁸¹
- Pada Maret atau April 1979 suatu kelompok di bawah pimpinan Agapito Gama dan wakilnya Celestino Pelay merundingkan penyerahan diri mereka dengan Batalion Marinir, Pasmars 3, di Ailemilari (Tequinaumata, Laga, Baucau). Mereka dijamin tidak akan dicelakai apabila bersedia menyerah. Pertama-tama mereka “dikonsentrasikan” tetapi tidak akan diperlakukan dengan buruk. Namun, dua minggu kemudian, Agapito Gama dan Celestino Pelay diambil oleh Camat Laga, Mateus, bersama pasukan dari Pasmars 3. Menurut laporan, mereka dibawa ke Koramil di Kota Baucau. Pada Mei atau Juni mereka dibawa ke Lacudala dan dieksekusi.²⁸²

* Paling tidak 19 anggota pasukan Tonsus João Branco diberitakan terbunuh di Lautém dan Dili, kira-kira pada waktu yang bersamaan [lihat Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa di Lautém, paragraf 313]. Beberapa bulan sebelumnya, mereka ikut-serta dalam serangan Indonesia atas Matebian, tetapi dituduh sebagai “berwajah ganda”/“bermuka-dua”. Kecurigaan Indonesia cukup beralasan: sesudah João Branco menyeberang ke pihak Indonesia, Xanana Gusmão menjalin kontak dengan dia dan organisasi klandestin yang bekerja dengannya di Subdistrik Tutuala [Xanana Gusmão, *Timor-Leste—Um Povo, Uma Patria*, hal. 37, 38-39, dan 41; Sarah Niner, *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão*, hal. 53, 55, dan 58].

265. Walaupun pada umumnya mereka yang dieksekusi di Lacudala memang menjadi sasaran karena peranan mereka dalam gerakan Resistansi, Komisi mendengar contoh-contoh di mana korban tidak memenuhi kriteria tersebut. Misalnya, Norberto Correia, karyawan di Kantor Departemen Pertanian Indonesia di Baucau, yang tidak pernah di gunung dan agaknya dibunuh karena punya dua anak lelaki yang berjuang bersama gerakan Resistansi.⁷

266. Komisi mendengarkan tentang kasus lain di mana orang yang dibunuh sesungguhnya merupakan korban pertunjukan kekerasan membabitnya yang mengerikan.

267. Pada 23 April 1979, Alcina Ximenes dan enam anggota keluarganya, termasuk seorang anak berumur empat tahun, ditangkap oleh tentara Indonesia dari Batalion 321 dan Hansip, di sebuah tempat bernama Afateri Doro di Afaça (Quelicai, Baucau), dan dibawa ke Desa Mulia (Laga, Baucau). Tiga orang laki-laki dewasa keluarga ini, Joaquim Ximenes, Domingos Ximenes, dan Celestino Belo, diikat, dan seluruh keluarga ini diangkut dengan mobil ke markas Armed (Artileri Medan) di Quelicai. Begitu tiba di sana Hansip mengatakan kepada komandan Armed bahwa tiga laki-laki itu adalah pemimpin di hutan. Tentara Armed segera menyerang ketiga laki-laki tersebut, memukuli dan menginjak-injak mereka.

268. Pada hari berikutnya, tiga orang itu dibawa ke Lacudala, disuruh berdiri dekat sebuah lubang di tanah, dan ditembak. Domingos dan Celestino Belo langsung tewas; Joaquim Ximenes tidak. Ia berhasil merangkak keluar dari lubang, walaupun mendapat tembakan tiga kali lagi. Para tentara itu mencengerkamnya di leher dan melemparkannya kembali ke lubang, lalu menghujannya dengan batu. Ia masih juga belum mati, sehingga mereka menguburnya hidup-hidup.

269. Ketika para prajurit Armed itu kembali ke pangkalan mereka, salah seorang perempuan, Alcina Ximenes, yang ketika itu sedang hamil, bertanya kepada mereka tentang tiga laki-laki anggota keluarganya itu. Mereka menjawab, jika ia ingin tahu boleh pergi bersama mereka dan melihatnya sendiri. Ia kemudian dibawa ke Lacudala, dan tiba di sini ia pun mereka bunuh. Sesudah itu anak yang baru empat tahun itu dipukuli sampai mati. Dua perempuan lagi tetap ditahan selama dua bulan, dan sepanjang waktu itu berulang kali mereka diperkosa oleh serdadu-serdadu dan Hansip.²⁸⁴

270. Sejumlah pemimpin senior dan menengah Fretilin dan para komandan Falintil yang menyerah atau ditangkap pada November – Desember 1978, dibawa ke Baucau; di sana personel Kopassandha menginterogasi mereka di pusat-pusat interogasi Hotel Flamboyan atau Uma Merah, kadang-kadang selama beberapa minggu, sebelum mereka dipindahkan ke markas RTP 18 di Teulale. Dari markas RTP 18 banyak di antara mereka yang kemudian dibawa ke Laculada untuk dieksekusi. Yang lain lagi dibawa ke Quelicai, langsung setelah penangkapan atau dari Koramil atau pangkalan militer lainnya.²⁸⁵ Dua orang yang selamat dari perjalanan ke Laculada diwawancarai oleh Komisi. Kedua orang itu ingat bahwa mereka diambil

* Norberto Correia menurut laporan dibunuh walaupun sudah memberi empat ekor kerbau kepada Kasi 1 (Kepala Seksi Intelijen) Kodim Baucau. [Komunike CRRN, Juli 1983].

dengan truk militer yang disebut Reo dan dibawa ke Koramil di Quelicai. Di sini mereka diinterogasi oleh Komandan Unit Armed 13, Letnan Satu Osaka, dibantu oleh penerjemah-penerjemah Timor-Leste, dan salah seorang yang paling jahat ialah M232. Armed 13, satu di antara batalion-batalion yang ketika itu di bawah komando RTP 18, juga melakukan eksekusi.²⁸⁶ Seorang mantan Hansip, Constantino dos Santos, mengatakan kepada Komisi bahwa salah satu tugasnya adalah menjaga dokumen Koramil di Quelicai. Ia ingat di antara dokumen-dokumen itu ada “buku merah” yang berisi nama 375 orang yang sudah dan akan dieksekusi.²⁸⁷

271. Zeferino Armando Ximenes mengingat:

Dengan tangan terikat saya dimasukkan di dalam kendaraan tentara yang disebut Reo, dan kami menuju Quelicai [dari markas RTP 18 di Kota Baucau] pada 13 Mei 1979. Saya ingat karena hari itu Hari Kenaikan Perawan Maria. Segera tiba di sana, kami diinterogasi sampai jauh malam... Kami tidak dipukul, tetapi hanya harus menunggu giliran untuk mati, karena kami telah diberitahu bahwa kami akan dikirim ke sekolah, seperti teman-teman kami Tadeo Soares Laicana, Domingos Gaio, dan Sola yang, kata mereka, dikirim ke sekolah di luar negeri. Pagi berikut sebuah kendaraan sudah menunggu kami di dekat gua, dan serdadu-serdadu Indonesia dengan daftar orang-orang Baucau yang terlibat dengan Fretilin sudah ada di sana untuk bertemu dan membawa kami ke Ponto Alto, di atas Quelicai.²⁸⁸

272. Zeferino Armando Ximenes lolos dari eksekusi karena intervensi seorang perwira logistik yang mengenalnya dan kebetulan sedang ada di pangkalan Armed 13 tepat pada saat ia akan dibawa ke tempat eksekusi.²⁸⁹

273. José Correia (Calala), yang telah menyerah kepada Mayor Iswanto di Laga bersama 13 pejuang Falintil bersenjata lengkap, juga lolos dari eksekusi. Ditangkap kembali Juni 1979, ia dibawa dengan kendaraan Reo yang baru saja datang dari Lospalos. Dalam kendaraan itu sudah ada sekitar 14 orang tawanan, yang diduga semua berasal dari Lospalos. Hanya dua orang yang dikenalnya, yaitu João Branco dan Gil Freitas. Dilaporkan kepada Komisi bahwa para tahanan duduk diam, tidak ada yang bicara. Tangan mereka terikat di belakang punggung. Mereka dilarang menoleh ke kiri atau ke kanan dan harus memandangi lurus ke arah depan kendaraan. Mereka pergi langsung ke markas Armed 13 di Quelicai dan kemudian ke Laculada. Di sini ia dimasukkan ke sebuah gedung, sambil menunggu giliran untuk dieksekusi. José disekap bersama sekitar 20 orang lain, semuanya dieksekusi, termasuk José Gaio. Para TBO dan Hansip bekerja siang dan malam, menyiapkan lubang kubur untuk korban-korban eksekusi.²⁹⁰

274. Komisi belum bisa memastikan perkiraan tertinggi tentang jumlah orang-orang yang dieksekusi di Quelicai. Namun Komisi yakin bahwa nama orang-orang yang telah disusun Komisi sendiri bukan merupakan daftar korban yang lengkap. Salah satu alasan untuk kesimpulan ini adalah bahwa orang-orang lain yang ditahan pada saat itu menjalani sebagian alur yang ditempuh oleh mereka yang, sebagaimana dilaporkan

kepada Komisi, telah dibunuh di Lacudala atau tempat-tempat lain di Quelicai: penangkapan, penahanan, dan interogasi yang disertai penyiksaan di salah satu pusat penahanan khusus, seperti Flamboyan, Kodim, atau markas RTP 16 di Baucau. Namun, dalam hal korban-korban yang lain ini, setelah melalui proses tersebut nasib mereka tidak diketahui, yaitu sekadar dilaporkan bahwa mereka telah hilang. Selain itu, banyak dari mereka yang dilaporkan telah hilang dalam kasus-kasus seperti itu, misalnya mantan sekretaris Fretilin untuk Baucau, Eduardo Ximenes, adalah kader senior atau menengah Fretilin atau komandan Falintil, dan dengan demikian juga sesuai dengan profil dari sebagian besar orang yang telah dibunuh di Quelicai. Karena itu, walaupun mereka memang tidak dilaporkan telah dibunuh di Quelicai, agaknya itulah yang telah terjadi pada mereka. Hipotesis ini diperkuat oleh kenyataan bahwa dalam beberapa pernyataan yang diterima Komisi, korban-korban dilaporkan sebagai telah hilang begitu saja, sementara informasi lain yang diterima Komisi menyatakan bahwa kenyataannya korban-korban itu memang telah dibunuh di Quelicai.²⁹¹

275. Sepanjang waktu ini kasus orang hilang terjadi di setiap subdistrik di Distrik Baucau. Beberapa di antara kasus-kasus tersebut dituturkan di bawah ini

Baguia

276. Pada September 1978, satu hari sesudah mereka menyerah, Abel do Carmo dan Alberto Freitas dipanggil oleh Camat Baguia dan diberitahu akan dibawa ke Laga. Namun sejak itu mereka tidak lagi pernah kelihatan.²⁹²

277. Pada Juni 1979, Camat M233 memerintahkan sekelompok orang naik ke Gunung Matebian untuk mencari Falintil. Mereka menangkap Gaspar Kasaroi, yang kemudian mereka serahkan kepada Koramil di Baguia. Ia pun kemudian hilang.²⁹³

278. Pada Desember 1978, delapan orang yang ditangkap oleh Batalion 502 di Gunung Matebian dicurigai sebagai anggota Falintil. Keluarga mereka diberitahu bahwa mereka akan disekolahkan dan hanya akan pulang kembali setelah lulus sekolah. Namun mereka tidak pernah pulang kembali.²⁹⁴

Baucau

279. Pada tanggal yang tak diketahui dalam 1979, Sekretaris Fretilin untuk Baucau, Eduardo Ximenes (Gamukai), kakak laki-lakinya, Badanau dan Bedusobu, serta kakak iparnya, Inácio da Costa, ditangkap oleh kepala desa Afaça (Quelicai), M234, dan kepala *aldeia* bernama M235. Empat orang itu diikat bersama dan dibawa ke Kodim di Baucau. Sang ipar laki-laki, yang meloloskan diri dari Kodim, mengabarkan kepada keluarga bahwa tiga saudara lainnya malam itu telah diambil untuk dibunuh. Menurut keterangan lain, yang tampaknya juga tentang matinya Eduardo Ximenes ia dibawa ke Quelicai, dan di sana para serdadu Indonesia membunuhnya.²⁹⁵

* Sementara itu Komisi mengetahui beberapa contoh bahwa orang yang saat itu hilang di Distrik Baucau, sebenarnya telah dieksekusi di tempat-tempat lain selain Lacudala.

280. Pada Maret 1979, tentara dari RTP 18 menangkap Antonio Correia di rumah Gaspar Sarmento di Suliwa, Buruma. Keberadaannya selanjutnya tidak diketahui. Pada 7 April 1979 dua Hansip menangkap Fernando Saldanha di Kaisahe, Ono-Sere, Buruma, dan mengatakan bahwa ia dipanggil oleh *liurai*/kepala desa, M237. Ia dibawa ke tangsi TNI di Teulale, Baucau (mungkin juga markas RTP 18). Sejak itu ia tidak pernah terlihat lagi.[†]

Laga

281. Pada November 1978, empat orang, Domingos dos Santos da Costa, yang menjadi *chefe de aldeia* (kepala *aldeia*) di hutan; José Rusa Fuik, seorang komandan *Força de Auto-Defesa* (Pasukan Pertahanan Diri); dan Pedro serta Amaro, keduanya pernah menjadi anggota *Força de Intervenção* (Pasukan Intervensi), ditangkap dan dibawa ke pos polisi militer di Laga. Sesudah diinterogasi, yang selama interogasi itu mereka berempat disiksa, tiga yang terakhir hilang.[‡]

282. Pada 1979 Luis Antero Ximenes, bekas pejuang Falintil, ditangkap di Laga oleh para anggota Koramil dan seorang pejabat dari pemerintah setempat, karena ia tidak mendaftarkan diri pada penguasa Indonesia setelah ia turun dari gunung. Tiga minggu kemudian keluarganya melihat ia dibawa pergi dalam sebuah jip. Sang deponen berlari mengikuti jip itu dan mendengar kata-kata terakhir ayahnya: “Bilang kepada ibumu, saya diikat dan tidak tahu akan dibawa ke mana. Jika saya mati, kita tidak akan bertemu lagi. Hanya jika saya hidup, kita masih akan bertemu.” Ia tidak pernah kembali.²⁹⁶

283. Pada 9 Juni 1979, seorang komandan Falintil, Afonso de Carvalho, menyerah pada pasukan Indonesia di Laga. Petang hari itu pasukan dari Batalion 745 membawanya ke Baucau untuk diinterogasi. Ia tidak pernah kembali.²⁹⁷

284. Sesudah menyerah kepada TNI di daerah Atelari pada 1979, seorang anggota dari kelompok yang terdiri atas enam orang, Luis Soares dos Santos, anggota Falintil, tertangkap menyimpan dua buah granat. Kelompok itu dibawa ke pos Atelari untuk pemeriksaan. Beberapa hari kemudian TNI mengumumkan bahwa mereka boleh kembali ke rumah masing-masing, tetapi Luis, Gaspar Soares, Mateus, dan Miguel dibawa ke Baucau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seminggu kemudian semuanya dibolehkan pulang, kecuali Luis. Luis tidak pernah kelihatan lagi sejak itu.²⁹⁸

* Pernyataan HRVD 7682. Untuk pembunuhan dan penghilangan lainnya di Subdistrik Baucau sekitar waktu itu, lihat Pernyataan HRVD 07826, 07930, dan 07805.

† CAVR, Profil Komunitas Desa Buruma, Subdistrik Baucau, Distrik Baucau (2 Desember 2003) berisi kisah seorang perempuan tak bernama yang pada 1979 mengirim makanan untuk suaminya yang ditahan, dan diberitahu bahwa ia sudah dibawa ke Quelicai.

‡ Pernyataan HRVD 7079. Untuk penghilangan lainnya di Subdistrik Laga tahun 1978-79, lihat Pernyataan HRVD 07699 02362, 00536, dan 05729.

Quelicai

285. Seorang laki-laki bernama Dai-Dara dituduh oleh tentara Indonesia sebagai anggota Falintil sesudah mereka memeriksa kedua tangannya setelah ia menyerah pada November 1978. Ia dibawa pergi dan sejak itu tidak pernah terlihat lagi.²⁹⁹

286. Pada 1979, dua orang yang dicurigai punya hubungan dengan Falintil, Ganuloi dari *aldeia* Gugulai dan Railari dari *aldeia* Karanu, ditangkap TNI dan dibawa ke Laga. Sejak itu mereka tidak pernah terlihat.³⁰⁰

Vemasse

287. Pada 16 November 1978, paramiliter Tim Sukarelawan menangkap empat orang, Domingos Lekiwati, Inácio Pereira, Januario dos Reis, dan Tomás Samut, dalam sebuah operasi di Gunung Ossuala, Vemasse. Malam itu pasukan Indonesia dan anggota Tim Sukarelawan membawa empat orang tersebut ke Hotel Flamboyan di Baucau. Mereka tidak pernah muncul lagi.³⁰¹

Venilale

288. Pada 8 November 1978 empat orang laki-laki, yang dua bernama Antonio Guterres, yang satu Joaquim Loi, dan satu orang lagi, turun dari Gunung Matebian dan ditangkap oleh tentara Indonesia ketika mereka sampai di Quelicai. Selanjutnya mereka dipaksa berjalan kaki selama empat hari sampai tiba di Uaibua, Uatohaco di Venilale. Setiba di pos TNI dan Hansip mereka ditahan oleh TNI, di bawah komando Mayor Tswanto dan Hansip di bawah komando M239. Ketika saudara perempuan dari salah seorang laki-laki itu, Maria, datang ke pos membawa makanan untuk mereka, ia diberitahu bahwa empat orang itu sudah dibawa ke Koramil di Venilale. Ia pergi ke Koramil dan di sana diberitahu bahwa kakaknya masih ada pos di Uaibua, sedangkan yang lainnya sudah dibebaskan. Antonio tidak pernah muncul lagi.³⁰²

289. Sekitar waktu yang sama Joaquim Guterres keluar dari hutan dan menyerah di Koramil Venilale pada Batalion 721. Nasib selanjutnya tidak diketahui.³⁰³

290. Suasana ketakutan yang diakibatkan oleh pembunuhan-pembunuhan itu berarti bahwa dampak pembunuhan-pembunuhan itu meluas melampaui mereka yang menjadi sasaran langsung dan orang-orang yang dekat dengan mereka, sebagaimana yang ditunjukkan dengan jelas dalam cerita-cerita berikut ini.

291. Maria da Silva Soares turun untuk menyerahkan diri di Quelicai pada Februari 1979 dengan Laikana. Beberapa waktu kemudian Maria mendengar bahwa Laikana telah ditangkap oleh dua orang Hansip dan hilang. Maria, khawatir akan nasibnya sendiri karena suaminya, Raimundo Cabral, adalah seorang pejuang Falintil yang masih bertahan di hutan, melarikan diri membawa enam anaknya ke hutan, di sekitar daerah Aneilo (Laisorolai Kraik, Quelicai).

292. Pada Maret 1979 dua anaknya, Amaro dan Justino, mati karena kelaparan dan sakit. Tidak lama sesudah itu, empat anaknya yang lain yaitu, Ana Maria, Betina, Anakai, dan Reaminga, juga mati. Saat itu Maria berhasil mendapat kontak dengan suaminya. Selama beberapa tahun ia berpindah-pindah bersama suaminya dan kawan-kawan Falintilnya, antara daerah Baucau dan Lautém, sering kali di bawah serangan pasukan Indonesia.³⁰⁴

Distrik Lautém

Tabel 14: Pembunuhan di Lautém 1978-79 menurut subdistrik dan kelompok

| Tempat/ kelompok | Nama | Jabatan | Keadaan kematian/ penghilangan yang dilaporkan |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Lospalos | Afonso de Albuquerque | Sekretaris Zona | Hilang dari Kodim Lospalos |
| | Afonso Savio | | Dibunuh Btn 745 di Lausepo |
| | Adão Amaral | | Dibunuh 1979 |
| | Alberto Nunes | Delegado Comissariado | Dibunuh 1979 |
| | Calisto Rego | Delegado Comissariado | Dibunuh di Kota Lospalos |
| | Dinis dos Santos Gandara | Assistente | Dibunuh oleh Batalion 745 di Kivira Ara, Tximo, Lore |
| | Duarte Amaral | | Meninggal setelah penyiksaan di Lospalos |
| | Felicidade dos Santos Gandara | Delegado Comissariado | Dibunuh oleh Btn 745 di Lausepo |
| | Francisco Sarmento Loy | Delegado Comissariado | Dibunuh oleh Hansip di Kota Lospalos |
| | Augusto Sanches | Colaborador, Sektor Ponta Leste | Dibunuh oleh Btn 745 di Kurisa Lore |
| | Jacinta Pereira | Assistente | Dibunuh oleh Btn 745 di Lausepo |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|---|
| | João Ernestino de Andrade Sarmento | Perawat | Hilang dari Kodim Lospalos pada April 1979 |
| | José Farseira | Fretilin | Hilang pada 1979 |
| | José Fernandes | | Hilang pada 1979 |
| | José Ferreira da Conceição | | Hilang pada 1979 |
| | Orlando Marques | camat, Iliomar | Hilang setelah dibawa ke pangkalan Btn 745 di Trisula, Juni 1979 |
| | Paulo Nunes | Assistente | Hilang setelah dibawa ke Lospalos |
| | Pedro Sanches | Wakil Komandan Sektor, Falintil | Dibunuh Btn 745 di Lausepo |
| | Raul Monteiro | Mantan seminaris | Dibunuh di Kota Lospalos |
| | Raul dos Santos | Delegado Comissariado | Hilang setelah dibawa ke Lospalos |
| | Victor dos Santos Gandara | | Kemungkinan dibunuh bersama Felicidade dos Santos Gandara dan Jacinta Pereira di Lore |
| Lospalos yang lain | | | |
| | Fernando Sanches | Mantan liurai Fuiloro | Dibunuh di Sapuada, Home |
| | Tomé Cristovão | Mantan Apodeti | Dibunuh di Sapuada, Home |
| Fuiloro | | | |
| | Adelino da Costa Savio | | Dibunuh pada 1979 |
| | Araújo | | Dibunuh pada 1979 |
| | Arnaldo da Costa | | Dibunuh pada 1979 |
| | Asu Chai | | Dibunuh pada 1979 |
| | Bokleman | | Dibunuh pada 1979 |
| | Carlos Cabral | | Dibunuh pada 1979 |
| | Crispin Lopes | | Dibunuh pada 1979 |
| | Duarte dos Santos (atau Duarte Amaral) | | Dibunuh pada 1979 |
| | Eugenio Mosinaca | | Dibunuh pada 1979 |
| | Feliciano | | Dibunuh pada 1979 |
| | Fernando Lavantu | | Dibunuh pada 1979 |
| | Jecarunu | | Dibunuh pada 1979 |
| | Jesus da Costa | | Dibunuh pada 1979 |

| | | | |
|--------|----------------------|--|---|
| | Julio Rodrigues | | Dibunuh pada 1979 |
| | Justino Kiar Moko | | Dibunuh pada 1979 |
| | Justino Sanches | | Dibunuh pada 1979 |
| | Lamberto de Jesus | | Dibunuh pada 1979 |
| | Lourenço Viana | | Dibunuh pada 1979 |
| | Luis Pereira | | Dibunuh pada 1979 |
| | Luis Ximenes | | Dibunuh pada 1979 |
| | Manuel Loi Malai | | Dibunuh pada 1979 |
| | Marcelino Pereira | | Dibunuh pada 1979 |
| | Nasorio Mendes | | Dibunuh pada 1979 |
| | Pedro | | Dibunuh pada 1979 |
| | Pedro Valentim | | Dibunuh pada 1979 |
| | | | |
| Loré I | Albino Adriano | | Dibunuh pada 1979 |
| | Antonio da Costa | | Dibunuh pada 1979 |
| | João | | Dibunuh Desember 1979 oleh Btn 745 |
| | Kaivaca | | Dibunuh pada 1979 |
| | Lavan Lovaia | | Dibunuh pada 1979 |
| | Loimoco | | Dibunuh pada Desember 1979 oleh Btn 745 |
| | Mário Provincial | | Dibunuh pada Desember 1979 oleh Btn 745 |
| | Melchior | | Dibunuh pada 1979 |
| | Pedro da Conceição | | Dibunuh pada 1979 |
| | Rogério da Conceição | | Dibunuh pada 1979 |
| | Sela Moko | | Dibunuh pada 1979 |
| | Sico Falu Malai | | Dibunuh pada 1979 |
| | Tanirauno | | Dibunuh pada 1979 |
| | Tito da Conceição | | Dibunuh pada 1979 |
| | | | |
| Raça | Agapito | | Dibunuh pada 1979 |
| | David Lopes | | Dibunuh pada 1979 |
| | Edmundo da Silva | | Dibunuh pada 1979 |
| | Filomeno | | Dibunuh pada 1979 |
| | João Baptista | | Dibunuh pada 1979 |
| | José Oliveira | | Dibunuh pada 1979 |

| | | | |
|----------------|-------------------|--|---|
| | Natalino | | Dibunuh pada 1979 |
| Bauro | | | |
| | Alvaro Lopes | | Dibunuh pada 1979 |
| | Crispin Caetano | | Dibunuh pada 1979 |
| | João Soares | | Dibunuh pada 1979 |
| | José Caetano | | Dibunuh pada 1979 |
| | Kaicavanu | | Dibunuh pada 1979 |
| | Moko | | Dibunuh pada 1979 |
| | Leogildo Freitas | | Dibunuh pada 1979 |
| | Lina dos Santos | | Dibunuh pada 1979 |
| | Luis Lopes | | Dibunuh pada 1979 |
| | Orlando Bosco | | Dibunuh pada 1979 |
| | Roberto Marques | | Dibunuh pada 1979 |
| | Rosario | | Dibunuh pada 1979 |
| Home | | | |
| | Capecai | | Dibunuh pada 1979 |
| | Soru-Koru | | Dibunuh pada 1979 |
| | Telu Kuro | | Dibunuh pada 1979 |
| Tutuala | | | |
| Mehara | | | |
| | Alarico da Costa | | Dibunuh di pos Btn 745 di Trisula, Assalaino, Fuiloro, pada Juni 1979 |
| | Alcino | | Dibunuh di pos Btn 745 di Trisula, Assalaino, Fuiloro, pada Juni 1979 |
| | Gonzalo Soares | | Dibunuh di pos Btn 745 di Trisula, Assalaino, Fuiloro, pada Juni 1979 |
| | Gabriel Soares | | Dibunuh di pos Btn 745 di Trisula, Assalaino, Fuiloro, pada Juni 1979 |
| | Carolino Carvalho | | Dibunuh di pos Btn 745 di Trisula, Assalaino, Fuiloro, pada Juni 1979 |
| | Miguel Monteiro | | Dibunuh di pos Btn 745 di Trisula, Assalaino, Fuiloro, pada Juni 1979 |

| | | | |
|------|-------------------------|----------------------------|---|
| | Orlando | Komandan Zona | Dibunuh di pos Btn 745 di Trisula, Assalaino, Fuiloro, pada Juni 1979 |
| | João Caetano | | Dibunuh di pos Btn 745 di Trisula, Assalaino, Fuiloro, pada Juni 1979 |
| | Antonio do Carmo | | Dibunuh di pos Btn 745 di Trisula, Assalaino, Fuiloro, pada Juni 1979 |
| | Victor Pires | Hansip | Hilang setelah ditangkap oleh Hansip pada 1979 |
| | Faustino Guimaraes | Hansip | Hilang setelah ditangkap oleh Hansip pada 1979 |
| | | | |
| Moro | Afonso | | Dibunuh di Daudere oleh Btn 745 pada 1979 |
| | Bendito | | Dibunuh di Daudere oleh Btn 745 pada 1979 |
| | Thomas da Costa | | Diserahkan oleh Kopassandha kepada Btn 745 dan hilang pada Mei 1979; Dilaporkan dibunuh di Assalaino, Fuiloro |
| | Rui | | Diserahkan oleh Kopassandha kepada Btn 745 dan hilang pada Mei 1979; Dilaporkan dibunuh di Assalaino, Fuiloro |
| | Paulo | | Dibunuh di Daudere oleh Btn 745 pada 1979 |
| | Alcino Fernandes Xavier | | Dibunuh di Adaveri, Serelau oleh Btn 508 dan Hansip, 1978 |
| | Antonio João Lopes | | Dibunuh di Adaveri, Serelau oleh Btn 508 dan Hansip, 1978 |
| | Domingos dos Santos | | Dibunuh di Adaveri, Serelau oleh Btn 508 dan Hansip, 1978 |
| | Afredo dos Santos | Klandestin/Mantan komandan | Dibunuh oleh Btn 745 di Etipiti, Com pada Juni atau Juli 1979 |
| | Oscar Victor | Klandestin | Dibunuh oleh Btn 745 di Etipiti, Com pada Juni atau Juli 1979 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|--|
| Virgilio dos Santos | Klandestin | Dibunuh oleh Btn 745 di Etipiti, Com pada Juni atau Juli 1979 |
| Duarte | | Dibunuh oleh Btn 745 di Etipiti, Com pada Juni atau Juli 1979 |
| Mário Amaral | | Dibunuh oleh Btn 745 di Etipiti, Com pada Juni atau Juli 1979 |
| Pedro | | Dibunuh oleh Btn 745 di Etipiti, Com pada Juni atau Juli 1979 |
| Antonio Xavier | | Dibunuh oleh Btn 745 di Etipiti, Com pada Juni atau Juli 1979 |
| José | | |
| Amaro Amaral | Hansip/klandestin | Diserahkan oleh Kopassandha ke Btn 745 dan hilang pada Mei 1979 |
| Venancio Gusmão | Hansip/klandestin | Diserahkan oleh Kopassandha ke Btn 745 dan hilang pada Mei 1979; Dilaporkan dibunuh di Assailaino, Fuiloro |
| Sebastião Maria Lourdes | Hansip/klandestin | Diserahkan oleh Kopassandha ke Btn 745 dan hilang pada Mei 1979 |
| Horacio Silverio Lopes | Hansip/klandestin | Diserahkan oleh Kopassandha ke Btn 745 dan hilang pada Mei 1979 |
| Rodolfo da Costa Junior | Hansip/klandestin | Diserahkan oleh Kopassandha ke Btn 745 dan hilang pada Mei 1979; Dilaporkan dibunuh di Sepelata, Bauro |
| Inacio dos Santos | Hansip/klandestin | Diserahkan oleh Kopassandha ke Btn 745 dan hilang pada Mei 1979 |
| Pedro dos Santos | Delegado | Hilang setelah ditangkap oleh Btn 745 |
| José da Silva | | Hilang setelah ditangkap oleh Btn 745 |
| Martinho da Silva | | Hilang setelah ditangkap oleh Btn 745 |
| Julio de Castro | | Hilang setelah ditangkap oleh Btn 745 |

| | | | |
|----------------------|-------------------------|------------|---|
| | Kacoli | | Dibunuh di Etipiti, Com oleh Btn 745 |
| | Pedro | | Dibunuh di Etipiti, Com oleh Btn 745 |
| | José | | Dibunuh di Serelau, Com oleh Btn 745 |
| | Julio | | Dibunuh di Serelau, Com oleh Btn 745 |
| | Alcino da Costa | | Dibunuh oleh Btn 408 |
| | Antonio da Costa | | Hilang dari Kodim pada Oktober 1978 |
| | Pedro Nogueira | | Ditangkap oleh Brimob, diserahkan ke Btn 745, disiksa dan dibunuh di Trisula, Assailaino, Fuiloro, Oktober 1979 |
| | Anudai | | Ditembak mati di pantai Lautém oleh Btn 745, 1979 |
| | Liabui 1 | | Ditembak mati di pantai Lautém oleh Btn 745, 1979 |
| | Liabui 2 | | Ditembak mati di pantai Lautém oleh Btn 745, 1979 |
| | Koofou | | Ditembak mati di pantai Lautém oleh Btn 745, 1979 |
| Kelompok Luro | | | |
| Benedito | Antero dos Santos | | Hilang dari Kodim, Februari 1979 |
| | Benedito Savio | Assistente | Hilang dari Kodim, Februari 1979 |
| | Bernadino Carvalho | | Hilang dari Kodim, Februari 1979 |
| | Antonio Reis | | Dibunuh segera setelah ditangkap oleh Btn 305 |
| | Cancio da Silva | | Dibunuh segera setelah ditangkap oleh Btn 305 |
| | Felix Gonzaga | | Dibunuh segera setelah ditangkap oleh Btn 305 |
| | Felisberto da Cruz | | Dibunuh segera setelah ditangkap oleh Btn 305 |
| | Fernando da Costa Lopes | | Dibunuh segera setelah ditangkap oleh Btn 305 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|
| Hermenegildo Viegas | | Dibunuh segera setelah ditangkap oleh Btn 305 |
| José Viegas | | Dibunuh segera setelah ditangkap oleh Btn 305 |
| Lambario Lopes | | Dibunuh segera setelah ditangkap oleh Btn 305 |
| Manuel Monteiro Leite | | Dibunuh segera setelah ditangkap oleh Btn 305 |
| Marcal dos Reis Noronha | | Dibunuh segera setelah ditangkap oleh Btn 305 |
| Maria Olga | | Hilang, kemungkinan Februari 1979 |
| Moises Fernandes | | Dibunuh segera setelah ditangkap oleh Btn 305 |
| Pedro Alvares Cabral | | Dibunuh segera setelah ditangkap oleh Btn 305 |
| Tomas Ximenes | | Dibunuh segera setelah ditangkap oleh Btn 305 |
| Zeferino Freitas | | Dibunuh segera setelah ditangkap oleh Btn 305 |
| Casimiro dos Santos Alegria | Assistente | Dilaporkan dibunuh oleh ABRI di Darapu'u, Baricafa, 1979 |
| Domingos Mário | | Hilang dari Koramil, Luro, 1979 |
| Aleixo Soares Malimau | | Hilang dari Koramil, Luro, Desember 1979 |
| Alfredo Ramos | | Hilang dari Koramil, Luro, Desember 1979 |
| Amelia da Silva | | Hilang dari Koramil, Luro, Desember 1979 |
| Antonio da Conceição | | Hilang dari Koramil, Luro, Desember 1979 |
| Hermenegildo da Costa | Fretilin assistente | Hilang dari Koramil, Luro, Desember 1979 |
| Manuel da Costa | | Hilang dari Koramil, Luro, Desember 1979 |
| Manuel Soares | | Hilang dari Koramil, Luro, Desember 1979 |
| Duarte dos Santos | | |
| João Freitas | Chefe de aldeia (ketua aldeia) | Dibunuh oleh Btn 315, 1979 |
| Antero Teixeira | Fretilin assistente | Hilang dari Luro, 1979 |

| | | | |
|---------------------|---------------------------|--|---|
| Para anggota Tonsus | Acacio Alvares Fernandes | | Hilang, kemungkinan dibunuh di Lacudala, Quelicai, Baucau, April 1979 |
| | Adão de Jesus Cristovão | | Hilang, Dilaporkan dibawa ke Dili, April 1979 |
| | Alarico Caetano | | Hilang, kemungkinan dibunuh di Lacudala, Quelicai, Baucau, April 1979 |
| | Aleixo Amaral | | Hilang, Dilaporkan dibawa ke Dili, April 1979 |
| | Armindo Alvares Fernandes | | Hilang, kemungkinan dibunuh di Lacudala, Quelicai, Baucau, April 1979 |
| | Artur Amaral | | Hilang, kemungkinan dibunuh di Lacudala, Quelicai, Baucau, April 1979 |
| | Domingos Savio | | Hilang, kemungkinan dibunuh di Lacudala, Quelicai, Baucau, April 1979 |
| | Duarte Romão Vieira | | Hilang, Dilaporkan dibawa ke Dili, April 1979 |
| | Eduardo dos Anjos Caetano | | Hilang, Dilaporkan dibawa ke Dili, April 1979 |
| | Fernando Lopes | | Hilang, kemungkinan dibunuh di Lacudala, Quelicai, Baucau, April 1979 |
| | Gil Cristovão | | Hilang, kemungkinan dibunuh di Lacudala, Quelicai, Baucau, April 1979 |
| | Inacio | | Hilang, kemungkinan dibunuh di Lacudala, Quelicai, Baucau, April 1979 |
| | Joaquim de Jesus | | Hilang, kemungkinan dibunuh di Lacudala, Quelicai, Baucau, April 1979 |

| | | | |
|--|------------------------|--|---|
| | Levorgildo dos Santos | | Hilang, kemungkinan dibunuh di Lacudala, Quelicai, Baucu |
| | Manuel Patricio Mendes | | Hilang, kemungkinan dibunuh di Lacudala, Quelicai, Baucau, April 1979 |
| | Nicolau Quintas | | Hilang, kemungkinan dibunuh di Lacudala, Quelicai, Baucu |
| | Patricio Fernandes | | Hilang, kemungkinan dibunuh di Lacudala, Quelicai, Baucau, April 1979 |
| | Paulino Pereira | | Hilang, kemungkinan dibunuh di Lacudala, Quelicai, Baucau, April 1979 |

Sumber: Pernyataan-pernyataan HRVD 4422, 5332, 0703, 2115, 3979, 2262, 1618, 1615, 2293, 0740, 1649, 1622, 1636, 2257, 2252, 2264, 0793, 0702, 0788, 0706, 0740, 0793, 0737, 0740, 0702, 0741, 0706, 0788, 0713, 1623, 2115, 3979, 2293, 2286, 1604, 2300, 2254, 1650, 2130, 7585, 3968, 9117, 4435, 5369, 5376, 5264, 5365, dan 2798; Profil Komunitas, Fuiloro, Bauro, Lore I, Raça dan Home (semua di Lospalos), Mehara dan Loro (keduanya di Tutuala), dan Iparira dan Laiara (Parlamento, Moro); Wawancara CAVR dengan Maria Teresa Corvelo Avila Marcel Sarmento, Dili, 25 September 2005; dan José Correia (Calala), Tirilolo, Baucau, 24 Maret 2004; Komunike CRRN.

293. Di Lautém, sekitar duapuluh orang telah dieksekusi atau hilang, tampaknya sebagai bagian dari operasi besar-besaran terhadap para bekas pemimpin Fretilin dan komandan Falintil. Namun, banyak di antara mereka yang dibunuh atau hilang pada waktu itu adalah orang-orang yang pada saat ditangkap dicurigai terlibat dalam kegiatan klandestin. Sebagian besar dari bekas pemimpin Fretilin dan komandan Falintil, yang tentang mereka Komisi menerima informasi spesifik, telah dibunuh atau hilang dalam April-Mei 1979, pada sekitar waktu yang sama saat rekan mereka di distrik-distrik lain juga mengalami nasib serupa. Pada saat penangkapan mereka, beberapa orang ada yang bekerja sebagai pegawai negeri Indonesia, sebagai guru, perawat, atau pegawai pemerintahan sipil. Yang lain lagi terus-menerus berada di dalam tahanan sejak ditangkap atau menyerahkan diri pada November 1978. Mereka khususnya dibawa ke Kodim di Lospalos, dan sesudah diinterogasi oleh anggota-anggota Kopassandha dibawa pergi oleh tentara dari Batalion 745 dan dibunuh. Walaupun banyak korban hilang begitu saja, dalam sejumlah kasus lain, orang-orang Timor-Leste yang bekerja pada tentara Indonesia, sebagai sopir atau sebagai pekerja pembantu lainnya, mengungkapkan tempat-tempat korban dieksekusi. Tempat yang paling banyak disebut-sebut ialah Assalaino, Lausepo, dan kuburan di dekat markas Batalion 745 di Desa Fuiloro (Lospalos), walaupun yang lain-lain dilaporkan dibawa ke tempat-tempat yang lebih jauh, seperti Ililapa dan Kurisa Apa, dekat Sungai Tximo di Lore dan Sapu Ara,

Home (Lospalos). Keluarga-keluarga korban hilang diberitahu bahwa para korban pergi melakukan operasi atau pergi bersekolah atau mengikuti kursus.

294. João Ernestino de Andrade Sarmiento adalah kepala perawat di Lospalos sebelum invasi Indonesia. Di hutan ia tetap bekerja sebagai perawat dan memberi pelatihan keperawatan. Pada 1977 ia ditangkap di Sektor Timur bagian Tengah sebagai “agen Xavier”, atas perintah anggota Komite Sentral yang berpangkalan di sana dan lolos eksekusi (lihat paragraf 245 bawah). Ia menyerah di kota Uato Carbau (Viqueque), sesudah jatuhnya *base de apoio* di Gunung Matebian pada November 1978.³⁰⁵

295. Suatu malam Januari 1979, setelah mendengar bahwa Hansip di Uato Carbau merencanakan membunuh João Ernestino de Andrade Sarmiento, keluarganya melarikan diri ke Lospalos. Ia kembali bekerja sebagai perawat di rumah sakit, walaupun setiap hari serdadu-serdadu Kopassandha mendatangi rumah mereka dan mengajak mereka bicara. Pada 30 Mei, sekitar pukul 21.00, seorang serdadu Kopassandha datang dan membawa João Ernestino de Andrade Sarmiento ke Kodim. Ia pergi bersama anak laki-lakinya yang berumur 12 tahun, João Zinho. João Zinho menunggu di luar ruangan ketika ayahnya sedang diinterogasi selama beberapa jam sebelum diperbolehkan pulang. Ketika itu ia mendengar suara teriakan. João Ernestino kembali ke rumah sekitar pukul 02.00. Kepada Maria Teresa ia bercerita bahwa ia, telah diinterogasi dan disiksa, dan disuruh kembali lagi ke Kodim pada pukul 05.00. Perpisahan dengan keluarga sudah terbayang. Ia kembali ke Kodim dengan João Zinho, tetapi pada tengah malam tengah malam João Zinho disuruh pulang. João Ernestino tidak pernah kembali. Jandanya diberitahu oleh sopir kendaraan yang membawa mereka ke tempat eksekusi, bahwa João Ernestino de Andrade telah dibunuh bersama beberapa tahanan lain di Lausepo. Jandanya tidak bisa memastikan informasi karena takut untuk mencari tulang-belulang suaminya.³⁰⁶

296. Sepasang suami-istri, ZN dan AO, menjadi *delegados* di hutan dan dilaporkan telah hilang pertengahan April 1979. Menurut laporan, AN diambil dari Kodim di Lospalos ke Kurisa Apa di dekat Sungai Tximo di Lore, di sana ia ditikam sampai mati dan mayatnya dilempar ke sungai. BN dilaporkan dibawa ke Lausepo dengan seorang perempuan lain, FO, dan kedua-duanya disiksa dan diperkosa sebelum diberondong senapan mesin sampai mati.³⁰⁷

297. Antero dos Santos dibawa ke Kodim 1629 di Lospalos tidak lama sesudah menyerahkan diri di Kotamuto (Luro) pada Februari 1979 dengan dua orang lainnya dari Luro, Afonso Albuquerque dan Bernadino Carvalho. Sekitar sebulan kemudian ia dibawa pergi dengan truk Hino ke arah Motolori, bersama Afonso Albuquerque, Benedito, Pedro Sanches, dan Afonso Savio. Nasib mereka selanjutnya tidak diketahui, namun terlihat mereka dibawa ke arah Iliapa.³⁰⁸

298. Francisco Sarmiento Loy, yang menjadi *delegado* di sektor Ponta Leste, menurut laporan tinggal di Lospalos ketika ia diambil di Mehara dan dibunuh, suatu saat pada 1979, oleh satu peleton Hansip di bawah komando M239. M239 sendiri yang menembak mati, membungkus mayat korban, dan membawanya

ke Lospalos. Di sana mayat itu diikat di sebuah kendaraan tentara dan diseret sepanjang jalan.³⁰⁹

299. Jumlah terbanyak pembunuhan dan penghilangan terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan kegiatan klandestin, yang dilaporkan kepada Komisi, terjadi di daerah Mehara-Com. Di daerah ini sekelompok pejuang Resistansi yang dipimpin Xanana Gusmão bersembunyi sesudah *base de apoio* di Gunung Matebian jatuh.³¹⁰

300. Beberapa kelompok orang ditangkap di daerah ini selama Juni-Oktober 1979, dan dibunuh atau hilang.

301. Salah satu sasaran ialah keluarga Humberto da Costa, *colaborador* komando sektor Ponta Leste, yang bersembunyi di hutan bersama Xanana Gusmão, dan beberapa orang yang dicurigai sebagai aktivis-aktivis gerakan Resistansi dari Mehara. Ayah Humberto, Gonsalo Soares; dua pamannya, Gabriel Soares dan Miguel Monteiro; seorang kakak, Alarico da Costa; dan empat orang lainnya lagi, Carolino Carvalho, João Caetano, Alcino, dan Antonio do Carmo, ditangkap di Mehara pada Juni 1979 oleh para anggota Batalion 745 dan dibawa pergi. Nasib mereka selanjutnya tidak diketahui, tetapi keluarga mereka yakin, antara lain berdasarkan informasi yang diberikan kepada mereka oleh para anggota Batalion 745, bahwa beberapa di antara mereka atau semuanya telah dibunuh di Pemakaman Upo Piti di Lospalos, di markas Batalion 745 di Trisula, Assalaino (Fuiloro, Lospalos), atau di dekat Silari. Humberto da Costa dan dua pejuang Falintil lainnya, yang seorang bernama Martinho, dilaporkan tewas di tengah pertempuran pada saat operasi yang melibatkan Batalion 745, Hansip, dan para anggota kelompok paramiliter Tim Nuklir pimpinan Camat Moro saat itu, Edmundo da Conceição, di daerah Com pada 17 Oktober 1979.³¹¹

302. Anggota-anggota Hansip di daerah Mehara-Com juga dicurigai dan ditangkap, dan hilang.

303. Tujuh orang Hansip dari *aldeia* Laiara (Parlamento, Moro, Lautém), Venancio Gomes, Amaro Amaral, Sebastião Maria Lourdes, Horacio Silverio Lopes, Rodolfo da Costa Junior, Inácio dos Santos, dan Justino dos Santos, yang direkrut sebagai Hansip di Desa Maina I, dipanggil ke kantor Koramil Moro pada 14 Mei 1979. Di sana mereka diinterogasi oleh anggota-anggota Kopassandha karena dicurigai telah memberi amunisi kepada Falintil. Beberapa jam kemudian pasukan dari Batalion 745 datang dan membawa mereka pergi, konon “pergi ke sekolah”. Hanya seorang di antara tujuh lainnya, Justino dos Santos, yang muncul kembali. Belakangan keluarga mereka mendengar bahwa setidaknya-tidaknya beberapa dari mereka telah dibunuh oleh Batalion 745 di Assalaino (Fuiloro, Lospalos) dan Sepelata (Bauro, Lospalos), dan tiga mayat di antara korban-korban itu ditemukan kemudian di kedua tempat itu.³¹²

304. Victor Pires dan Faustino Guimarães dari *aldeia* Loro (Tutuala) adalah dua orang Hansip yang hilang pada 1979 bersama beberapa orang lainnya, sesudah mereka ditangkap oleh komandan mereka sendiri, M239. Ketika saudara laki-lakinya menanyakan kepada M239 tentang keadaan Victor Pires, ia diberitahu bahwa Victor Pires “sedang bekerja di hutan”. Tetapi, baik Victor maupun Faustino

tidak pernah muncul kembali.³¹³ Menurut kakak laki-lakinya, Victor Pires adalah Hansip bersama Faustino dan orang-orang lain yang namanya telah dilupakan, di bawah pimpinan M239. Ketika deponen bertanya kepada M239 tentang keadaan adiknya, M239 mengatakan bahwa sang adik sedang bekerja di hutan. Tapi, ia tidak pernah kembali.³¹⁴

305. Di Moro (Lautém), sekurang-kurangnya ada tiga kelompok berbeda serta beberapa orang yang dicurigai terlibat dalam kegiatan klandestin, ditangkap dan dieksekusi pada sekitar waktu yang sama, selama apa yang tampaknya merupakan operasi yang dilakukan oleh Batalion 745, yang bertujuan menghancurkan jaringan klandestin di daerah tersebut.*

- Lima orang laki-laki dari Mua Puso (Aurlopo, Com), Oscar Victor, Duarte, Mário, Pedro, dan Virgilio, ditangkap Juni atau Juli 1979 oleh lima personel dari Batalion 745 atas perintah komandan mereka, Kapten Joko Himpuno. Sekitar senja, sesudah disiksa di pos Batalion 745 di Com, mereka dibawa ke pantai di Etepiti (Com) dan dibunuh di sana. Menurut laporan, Virgilio ditembak pada belakang kepalanya, lalu ditusuk punggungnya oleh tiga prajurit Batalion 745 yang bernama M240, M241, dan M242. Babinsa menyuruh keluarga korban mengambil mayat mereka. Pada hari berikut para anggota Batalion 745 membakar semua rumah di Mua Puso. Lima orang itu memang aktif dalam gerakan klandestin, tetapi mereka dilaporkan ditangkap karena seorang laki-laki lain, Caetano Vilanova, melarikan diri ke hutan.³¹⁵
- Seorang deponen yang direkrut secara paksa untuk ikut dalam operasi Batalion 745 tersebut, di bawah komando M243, melaporkan bahwa sesudah membakar rumah-rumah di Mua Puso, pasukan bergerak menuju Etepiti dan di sana mereka menangkap lima orang laki-laki lagi, yaitu Pedro, Kacoli, Julio, José, dan seorang lagi yang namanya tidak diketahui oleh deponen. Mereka ditangkap karena dicurigai menjadi anggota gerakan klandestin. Mereka dibawa ke hutan dan diinterogasi. Pedro dan orang kelima lalu dibawa ke kantor desa di Com, sedangkan tiga lainnya dibawa ke sebuah tempat bernama Seler. Sesudah dipukuli bertubi-tubi, tiga orang itu dibawa ke suatu tempat bernama Keermoko, tempat mereka dipenggal satu demi satu dan tubuh mereka dibiarkan membusuk. Deponen kemudian mengetahui bahwa Pedro dan Kacoli juga telah dibunuh.³¹⁶
- José da Silva adalah ketua *delegado* di Com (Moro, Lautém). Pada 15 atau 16 Juni 1979 serdadu-serdadu dari Batalion 745, di bawah pimpinan M243, menangkapnya bersama dua kemenakannya, Martinho da Silva dan Pedro dos Santos, yang juga mantan *delegado*, dan sepupu mereka, Julio de Castro.

* Pada 1979, sesudah ditahan selama lebih dari satu tahun di kamp pemukiman kembali di Parlamento, penduduk daerah ini diizinkan kembali ke rumah masing-masing. Tapi, ABRI membongkar jaringan klandestin bernama Ajuda Nan Maran, dan dikirimalah penduduk desa Muaspuso, Vailovaya, dan Lohomata ke kamp pemukiman kembali yang baru di Com, yang urusan keamanannya dipegang oleh Batalion 512 dan 745; namun dilaporkan bahwa kondisinya justru lebih buruk dari ketika mereka di Parlamento [Wawancara CAVR dengan Edmundo da Cruz, Com, Moro, Lautém, tanpa tanggal].

Mereka dibawa dari *aldeia* Iraonu dan Pitileti di Com ke *aldeia* *Etipiti*.³¹⁷ Komandan Indonesia itu mengatakan mereka akan pergi mengikuti operasi di Gunung Caicere untuk mencari Fretilin dan hanya akan pulang setelah operasi selesai. Tetapi mereka tidak pernah pulang. Menurut pernyataan yang diberikan kepada Komisi oleh istrinya, José da Silva terus menjaga hubungan dengan Fretilin di perbatasan daerah Mehara-Com.³¹⁸ Sumber lain menyatakan kepada Komisi bahwa Martinho da Silva dan Pedro dos Santos biasa mencari ikan untuk diberikan kepada Fretilin di hutan.³¹⁹

- Mungkin pada 1979, Alcino Fernandes Xavier, Domingos dos Santos, dan Antonio João Lopes ditangkap oleh serdadu-serdadu dari Batalion 508 bersama para anggota Hansip dan polisi, serta camat sekaligus komandan kelompok paramiliter Tim Nuklir, M244, karena dicurigai terlibat dalam kegiatan klandestin. Mereka dibawa ke suatu tempat di hutan bernama Adaveri (Serelau, Moro), dan di situ Alcino dibunuh.*
- Estanislau, Afonso, Bendito, Thomás da Costa, Paulo, dan Rui ditangkap di Daudere, Moro, suatu ketika pada 1979 oleh anggota-anggota Batalion 745, ketika lima orang itu sedang memetik kelapa. Mereka dibawa ke tempat yang tak jauh dari situ, yaitu Leiresi, dan ditanyai apakah mereka mengenal Paulino, komandan Falintil yang masih ada di hutan. Ketika mereka menyatakan tidak tahu samasekali tentang Paulino, mereka diikat bersama. Malam itu Estanislau berhasil melarikan diri tetapi yang lainnya lalu dibawa ke suatu tempat bernama Serekara (Daudere, Moro) dan ditembak mati di sana. Yang lain juga ditembak mati larut malam itu. Dua deponen mendengar suara tembakan itu. Mayat mereka dibiarkan tidak terkubur selama tiga tahun di tempat pembunuhan.³²⁰
- Dalam kasus lain yang mungkin terkait, yang terjadi di daerah yang sama dan pada sekitar waktu yang sama pula, Anudai ditangkap pada 1979 di Desa Lautém (Moro, Lautém) oleh seorang anggota Batalion 745 bernama M245 dan seorang TBO M246. Ia ditangkap bersama istrinya, Libabui 1, bibi deponen, Libabui 2, dan anggota keluarga lainnya, Koofou. Mereka berempat dibawa ke pantai di Lautém, tempat M245 menembak mati Libabui 1 dan melukai paha Anudai. M245 memberitakan kepada anggota keluarga lainnya apa yang telah terjadi, dan dua orang di antara mereka pergi untuk mengambil mayat Libabui 1. Petang hari itu juga M245 dan M246 kembali menahan Anudai, Libabui 2, dan Koofou, dan membawa mereka kembali ke pantai lalu menembak mati ketiga orang tersebut. Keluarga mereka terlalu takut untuk mengambil jenazah mereka sampai tiga atau empat tahun kemudian.³²¹

306. Di samping dilakukannya penangkapan kelompok seperti ini, orang yang dicurigai menjalin hubungan dengan Falintil juga ditangkap dan dieksekusi di Moro pada masa itu.

* Pernyataan HRVD 2262 (yang memberi informasi: tahun 1978) dan 2293 (yang memberi informasi: tahun 1979).

307. Tentara Indonesia menangkap Alcino da Costa Ximenes pada Juni 1977 di Moro dan membawanya ke Dili, tempat ia diinterogasi selama empat bulan. Ketika ia kembali ke rumahnya di Desa Serelau di Moro, ia diam-diam meneruskan kegiatannya dalam Resistansi. Suatu saat pada 1978 ketika sedang keluar berjalan-jalan, ia dikepung oleh pasukan dari Batalion 408, yang memerintahkannya memetik buah kelapa. Ketika ia sedang melakukan perintah mereka, ia ditembak mati dari bawah. Camat M244 mengatakan kepada istri Alcino, sambil mengancam dengan todongan pistol, bahwa Alcino menyerang prajurit Indonesia kemudian melarikan diri ke hutan.³²²

308. Pada Oktober 1979 seorang anggota gerakan klandestin bernama Antonio da Costa dari Fuiluro (Lospalos, Lautém) menerima surat dari pemimpin Falintil, Dinis, agar diteruskan ke kepala desa, M248. Antonio da Costa menyampaikan surat itu kepada M248, dan M248 menyerahkannya ke Kodim (Komando Distrik Militer) di Lospalos. Kemudian Jaime menangkap Antonio dan menyerahkannya ke Komandan Koramil (Komando Rayon Militer) Moro, yang bernama M247. Selanjutnya M247 memerintahkan Tim Nuklir, kelompok paramiliter yang dipimpin oleh M244, agar membawa Antonio ke markas Kodim. Di Kodim Antonio ditahan bersama seorang bernama Carlos. Ketika Carlos dibebaskan, ia menceritakan Antonio telah dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui.³²³

309. Pedro Nogueira, ditangkap oleh anggota Brimob di Leven, Com pada 20 Oktober 1979; lalu dibawa ke markas Batalion 745 di Trisula, Assalaino (Bauro, Lospalos). Di sana ia disiksa, termasuk bagian-bagian tubuhnya disayat dengan pisau dan dibakar. Pada hari itu juga tiga orang anaknya, Amelia, Juliana, dan Ermenegildo dibawa ke pos Batalion 745 di Luarai, Fuiluro (Lospalos). Di sana mereka diinterogasi tentang Pedro, ayah mereka, terutama tentang apakah ia pernah mengirim bantuan untuk Falintil, secara khusus untuk anak laki-lakinya, Julio. Sepanjang interogasi anak-anak itu dipukuli, tapi diizinkan pulang pada 23 Oktober. Pada hari itu juga Pedro ditembak mati. Pada 25 Oktober anak-anak dipanggil lagi ke pos Batalion 745 di Luarai, dan ditanya apakah Julio pernah kembali ke Leven sejak Pedro meninggal.³²⁴

310. Pada waktu ini juga anggota-anggota kelompok klandestin dari subdistrik lainnya di Lautém juga hilang atau dieksekusi. Pada awal Desember 1979, delapan orang yang dicurigai menjadi bagian dalam jaringan klandestin di Subdistrik Luro—Duarte dos Santos, Aleixo Soares (Malimau), Alfredo Ramos, Amelia da Silva, Antonio da Conceição, Hermenegildo da Costa, Manuel Simões, dan Manuel dos Santos—diperintahkan oleh Camat Luro, M280, untuk pergi ke Koramil Luro. Delapan orang itu terakhir terlihat diterbangkan dengan helikopter dari koramil pada pukul 06.00 pada 3 Desember 1979. Keluarga mereka diberitahu bahwa kelompok itu sedang pergi mengikuti kursus tentang ideologi negara Indonesia (Penataran P4: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di Lospalos. Keberadaan mereka selanjutnya tidak diketahui.³²⁵

311. Suatu ketika sebelum delapan orang itu hilang, seorang Hansip, Afonso Pinto, membawa CO dan Hermenegildo da Costa ke rumah Camat. Sesudah Hermenegildo mengatakan tidak tahu-menahu tentang surat dari Falintil kepada Camat, kedua orang

itu diancam namun diizinkan pulang. Beberapa hari kemudian CO dibawa ke pos Batalion 126, di mana sudah ada tahanan lain, Alfredo Ramos. Di sini ia diperkosa sebelum disuruh pulang. Pagi-pagi hari berikutnya CO dipanggil ke Koramil, di mana sudah ada tujuh tahanan lain. Pada hari itu juga mereka hilang.³²⁶

312. Selain mantan pemimpin Fretilin dan para komandan Falintil, pada saat ini juga ada orang-orang yang dibunuh setelah menyerah dan diintegrasikan dalam rezim pendudukan Indonesia sebagai pegawai negeri sipil atau tenaga bantuan untuk pasukan keamanan sebagai Hansip atau Tonsus.

313. Mereka itu termasuk anggota-anggota Tonsus yang dipimpin João Branco, yang beberapa di antaranya dilaporkan telah dieksekusi di Quelicai (lihat di paragraf 264 atas), dan beberapa orang lainnya mungkin dibunuh di Lospalos (lihat Tabel 13: Pembunuhan di Lautém 1978-79, setelah paragraf 242). Juga termasuk Orlando Marques dari Raça, yang ditangkap pada Februari 1976 ketika pasukan payung Indonesia mendarat di dataran Lospalos. Ia ikut serta dalam pemerintahan sipil Indonesia dan menjadi camat Iliomar. Menurut pernyataan yang diberikan kepada Komisi oleh istrinya, ia ditangkap di Tutuala pada Juni 1979 oleh tentara Batalion 745 dan dibawa ke markas batalion ini di Trisula. Keluarganya tidak diizinkan mengunjunginya dan sejak itu ia tidak lagi kelihatan.³²⁷

314. Melalui lokakarya profil komunitas, Komisi juga menerima nama dari sekitar 40 orang lain lagi, yaitu dari desa-desa di Subdistrik Lospalos, yang dilaporkan telah dieksekusi atau hilang pada 1979. Sangat sedikit yang diketahui tentang keadaan sekitar eksekusi dan hilangnya mereka itu. Satu kasus khusus terkait hal ini, yang diketahui lebih baik ketimbang yang lain-lain pada umumnya, ialah kasus Mário Provincial, seorang petani dari *aldeia* Vailana di Desa Lore I, yang berumur 56 tahun ketika ia meninggal. Menurut pernyataan yang diberikan kepada Komisi, ia bersama dua penduduk desa lainnya diambil oleh tentara dari Batalion 745 pada Desember 1979, pura-pura disuruh membangun gubuk untuk batalion itu. Tapi kenyataannya mereka dibawa ke satu tempat di dekat situ dan, mengingat suara tembakan yang terdengar oleh penduduk desa yang lain, dipastikan mereka semua telah ditembak mati.³²⁸

* Dalam kasus yang mungkin berhubungan dengan kasus ini, Domingos Mário, seorang TBO di Koramil, di Luro ditahan karena menulis surat kepada Filomeno Branco untuk seorang anggota Falintil di hutan. Diberitakan ia diambil oleh tentara Indonesia dari Batalion 305 ke satu tempat bernama Nundelarin, juga di Luro, tempat ia ditikam dengan bayonet dan disudut dengan puntung rokok pada pipinya. Sembilan hari kemudian ia diizinkan pulang. Tiga hari kemudian ia dijemput tentara Indonesia dan Hansip dan juga hilang. [Pernyataan HRVD 4435]. Orang-orang lain yang juga ditangkap di Luro sekitar waktu yang sama, dengan tuduhan mempunyai hubungan dengan Fretilin/Falintil dan selanjutnya dibunuh atau hilang, antara lain João Freitas, kepala *aldeia* Buanumar (Kotamoto, Luro) [Pernyataan HRVD 2798]; Casimiro dos Santos Alegria, mantan *assistente* dari Baricafa (Luro, yang menurut laporan dibunuh oleh tentara Indonesia di Darapu'u, Baricafa pada 1979, sesudah ia ditangkap di Gunung Matebian pada 1978 [Pernyataan HRVD 9117], dan Antero Teixeira, seorang mantan *assistente*.

Distrik Manufahi

Tabel 15: Pembunuhan di luar hukum dan pemindahan paksa di Distrik Manufahi, 1978-79

| Nama | Jabatan | Waktu dan tempat penangkapan/ penyerahan diri | Waktu pembunuhan/ penghilangan | Pelaku | Sumber |
|------------------------|----------------------|---|---|--------------------------------|--|
| Alas | | | | | |
| Anselmo | Falintil | | Dipukuli sampai mati oleh ABRI di Alas | ABRI | Profil Komunitas, Debu-Waen, Mahaquidan, Alas |
| Manuel Luis | Falintil | ditangkap 1978 | Dibunuh ABRI di Uma Metan | ABRI | Profil Komunitas, Lurin, Taitudak, Alas |
| Florindo da Costa | | ditangkap 1978 | Dibunuh ABRI di Uma Metan | ABRI | Profil Komunitas, Lurin, Taitudak, Alas |
| Duarte Almeida | | | Dibunuh di Uma Metan, Februari 1979 | | HRVD 1587, 1506, 1576; Profil Komunitas, Taitudak, Manus, Alas |
| João da Silva | | | Dibunuh di Uma Metan, Februari 1979 | | HRVD 1576; Profil Komunitas, Taitudak, Manus, Alas |
| João Martins Fernandes | | | Dibunuh di Uma Metan, Februari 1979 | | HRVD 1576; Profil Komunitas, Taitudak, Manus, Alas |
| Remigio Baptista | | | Dibunuh di Uma Metan, Februari 1979 | | HRVD 1576; Profil Komunitas, Taitudak, Manus, Alas |
| Luis Monteiro | | | Dibunuh di Hato-Udo, Februari 1979 | | HRVD 1576; Profil Komunitas, Taitudak, Manus, Alas |
| Antonio Cepeda | Sekretaris Zona Same | Manu-Mera, Alas, Maret 1979 | Dibunuh di Halikuloli oleh Hansip setelah diinterogasi dan disiksa oleh Kodim dan Kopassandha, Maret 1979 | Kodim, Kopassandha, dan Hansip | HRVD 4750 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| Antonio Lisboa | Komandan Peleton | Manu-Mera, Alas, Maret 1979 | Dibunuh di Halikuloli oleh Hansip setelah diinterogasi dan disiksa oleh Kodim dan Kopassandha, Maret 1979 | Kodim, Kopassandha, dan Hansip | HRVD 4750 |
| Luis Marçal | Sekretaris Desa Letefoho | Manu-Mera, Alas, Maret 1979 | Dibunuh di Halikuloli oleh Hansip setelah diinterogasi dan disiksa oleh Kodim dan Kopassandha, Maret 1979 | Kodim, Kopassandha, dan Hansip | HRVD 4750, Profil Komunitas Letefoho |
| José Henrique | Komandan Kompil | Manu-Mera, Alas, Maret 1979 | Dibunuh di Halikuloli oleh Hansip setelah diinterogasi dan disiksa oleh Kodim dan Kopassandha, Maret 1979 | Kodim, Kopassandha, dan Hansip | HRVD 4750 |
| Mateus Cortereal | Komandan Zona Same | Hatu Rai, Same, Maret 1979 | Dibunuh di Halikuloli oleh Hansip setelah diinterogasi dan disiksa oleh Kodim dan Kopassandha, Maret 1979 | Kodim, Kopassandha, dan Hansip | HRVD 4750 |
| Jaime Sarmento | Komandan Zona Maubisse | Hatu Rai, Same, Maret 1979 | Dibunuh di Halikuloli oleh Hansip setelah diinterogasi dan disiksa oleh Kodim dan Kopassandha, Maret 1979 | Kodim, Kopassandha, dan Hansip | HRVD 4750 |
| Pedro Cortereal | Sekretaris Desa Holarua | Hatu Rai, Same, Maret 1979 | Dibunuh di Halikuloli oleh Hansip setelah diinterogasi dan disiksa oleh Kodim dan Kopassandha, Maret 1979 | Kodim, Kopassandha, dan Hansip | HRVD 4750, 4081?, 4073? |
| Martinho Cortereal | Komandan Peleton | Hatu Rai, Same, Maret 1979 | Dibunuh di Halikuloli oleh Hansip setelah diinterogasi dan disiksa oleh Kodim dan Kopassandha, Maret 1979 | Kodim, Kopassandha, dan Hansip | HRVD 4750, 4081?, 4073? |
| Armando da Silva | Komandan | | Dibunuh di Halikuloli oleh Hansip setelah diinterogasi dan disiksa oleh Kodim dan Kopassandha, Maret 1979 | Kodim, Kopassandha, dan Hansip | HRVD 4750 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--|
| Vidal | Komandan | | Dibunuh di Halikuloli oleh Hansip setelah diinterogasi dan disiksa oleh Kodim dan Kopassandha, Maret 1979 | Kodim, Kopassandha, dan Hansip | HRVD 4750, Profil Komunitas Letefoho |
| Luciano | Komandan | | Dibunuh di Halikuloli oleh Hansip setelah diinterogasi dan disiksa oleh Kodim dan Kopassandha, Maret 1979 | Kodim, Kopassandha, dan Hansip | HRVD 4750, Profil Komunitas Letefoho |
| Manuel Adao | | | Dibunuh oleh Hansip di Uma Metan, Alas, 1979 | Hansip | HRVD 5410 |
| Marcial Osvaldo | | | Dibunuh oleh Hansip di Uma Metan, Alas, 1979 | Hansip | HRVD 5410 |
| João Bosco Francisco | Colaborador Alas | | | Btn 401/Hansip? | HRVD 5153, 3427, 3429, 3401. 4071; Profil Komunitas Debu-Waen, Mahaquidin, Alas, Manufahi |
| José Maria (Mausiri) | Adjunto | Kolkeu, 11 Maret 1979 | Hilang dari Uma Metan, Alas, Maret 1979 | Btn 401/Hansip? | HRVD 5153, 3427, 3429, 3401. 4071, 4088; Profil Komunitas Debu-Waen, Mahaquidin, Alas, Manufahi; Ringkasan Kasus |
| Ermelita Coelho (Siri Lou) | OPMT Alas | Kolkeu, 11 Maret 1979 | Hilang dari Uma Metan, Alas, Maret 1979 | Btn 401/Armed 10/Hansip? | HRVD 5153, 3427, 3429, 3401. 4071, 4088; Profil Komunitas Debu-Waen, Mahaquidin, Alas, Manufahi; Ringkasan Kasus |
| Eduardo dos Anjos (Kakuk) | Komite Sentral Fretilin | Kolkeu, 11 Maret 1979 | Hilang dari Uma Metan, Alas, Maret 1979 | Btn 401/Armed 10/Hansip? | HRVD 5153, 3427, 3429, 3401. 4071, 4088; Profil Komunitas Debu-Waen, Mahaquidin, Alas, Manufahi; Ringkasan Kasus |

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|---|---|------------------|---|
| Placido da Costa | Komandan Kompil | Hilang dari Uma Metan, Alas, Maret 1979 | Hilang dari Uma Metan, Alas, Maret 1979 | Hansip | HRVD 5153, 3427, 3429; Profil Komunitas Debu-Waen, Mahaquidin, Alas, Manufahi |
| Hipolito Fernandes | Komandan Peleton | Hilang dari Uma Metan, Alas, Maret 1979 | Hilang dari Uma Metan, Alas, Maret 1979 | Hansip | HRVD 5153, 3427, 3429; Profil Komunitas Debu-Waen, Mahaquidin, Alas, Manufahi |
| Benjamin da Costa | Komandan Serac, Alas | Hilang dari Uma Metan, Alas, Maret 1979 | Hilang dari Uma Metan, Alas, Maret 1979 | Hansip | HRVD 5153, 3427, 3429, 3414, 3442; Profil Komunitas Debu-Waen, Mahaquidin, Alas, Manufahi |
| Isidoro Fernandes | Falintil | Hilang dari Uma Metan, Alas, Maret 1979 | Hilang dari Uma Metan, Alas, Maret 1979 | Hansip | HRVD 5153, 3427, 3429; Profil Komunitas Debu-Waen, Mahaquidin, Alas, Manufahi |
| Antonio Vicente | | Hilang dari Uma Metan, Alas, Maret 1979 | Hilang dari Uma Metan, Alas, Maret 1979 | Hansip | HRVD 5153, 3427, 3429; Profil Komunitas Debu-Waen, Mahaquidin, Alas, Manufahi |
| Vicente Antonio Dias | | | Dibunuh di antara Uma Metan dan Betano, 1979 | ABRI | HRVD 3431 |
| Herminio Baptista | | | Dibunuh di Lebos, 10 atau 11 Maret 1979 | Hansip/Linud 100 | HRVD 4071, 4069, 4088, 4100, 4069 |
| Estevao da Costa | | | Dibunuh di Lebos, 10 atau 11 Maret 1979 | Hansip/Linud 100 | HRVD 4071, 4069, 4088, 4100 |
| Maliuca | | | Dibunuh di Lebos, 10 atau 11 Maret 1979 | Hansip/Linud 100 | HRVD 4088, 4100 |
| Francisco da Silva | Delegado | | Dibunuh di Uma Metan, Alas, 10 atau 11 Maret 1979 | ABRI/Hansip | HRVD 4088, 4100 |
| Pedro Pereira | | | Dibunuh di Uma Metan, Alas, 10 atau 11 Maret 1979 | ABRI/Hansip | HRVD 4088, 4100 |
| Vidal Cina da Cruz | Komandan | Betano, 1979 | Dibunuh di Uma Metan, Alas, 10 atau 11 Maret 1979 | ABRI/Hansip | HRVD 4088, 4100 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---|-------------|---|
| Francisco da Conceição | Delegado | Betano, 1978 | Maret atau Juli 1979; hilang; dilaporkan dibunuh di Sungai Karau Ulun, Betano | ABRI/Hansip | HRVD 4073, 4081, 4085; Wawancara CAVR dengan Saturnino Tilman |
| Franco da Costa | Assistente Político | Betano, 1978 | Maret atau Juli 1979; hilang; dilaporkan dibunuh di Sungai Karau Ulun, Betano | ABRI/Hansip | HRVD 4073, 4081, 4085; Wawancara CAVR dengan Saturnino Tilman |
| Paulino Veridial (Teli) | Delegado | Betano, 1978 | Maret atau Juli 1979; hilang; dilaporkan dibunuh di Sungai Karau Ulun, Betano | ABRI/Hansip | HRVD 4073, 4081, 4085; Wawancara CAVR dengan Saturnino Tilman |
| Martinho Pereira (Aulaco) | Delegado, Ailalu | Betano, 1978 | Maret atau Juli 1979; hilang; dilaporkan dibunuh di Sungai Karau Ulun, Betano | ABRI/Hansip | HRVD 4073, 4081, 4085; Wawancara CAVR dengan Saturnino Tilman |
| Sebastiao Nunes | Wakil Delegado | Betano, 1978 | Maret atau Juli 1979; hilang; dilaporkan dibunuh di Sungai Karau Ulun, Betano | ABRI/Hansip | HRVD 4073, 4081, 4085; Wawancara CAVR dengan Saturnino Tilman |
| Bernadino Almeida | | | Maret atau Juli 1979; hilang; dilaporkan dibunuh di Sungai Karau Ulun, Betano | ABRI/Hansip | HRVD 4073, 4081, 4085 |
| Clementino da Conceição | | | Maret atau Juli 1979; hilang; dilaporkan dibunuh di Sungai Karau Ulun, Betano | ABRI/Hansip | HRVD 4073, 4081, 4085 |
| João Nascimento Pires | | Nu Laran, Taitudak, Alas | 1979; hilang; dilaporkan dibunuh oleh Hansip di Lacro | Hansip | HRVD 342, 802, 3433 |
| Edmundo Amaral | | | 1979; dibunuh ABRI di Fore Karin, Dotik, Alas | ABRI | HRVD 3438 |
| Crispin | | | 1979; dibunuh di Uma Metan | Hansip | HRVD 4023 |
| Eulalia | | Uma Metan, Taitudak, Alas | 10 Mei 1979; dibunuh di Sungai Soisara, Mahaquidan, Alas | Hansip | HRVD 3423, 3456 |

Turiscai

| | | | | | |
|----------------|----------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Alucio Barbosa | Delegado | Ailelek, Fahinehan, 1979 | 1979; ditembak di Manumera oleh Koramil/Hansip/Linud100/Linud 700 | Koramil/Hansip/Linud100/Linud 700 | HRVD 6610, 6610, 6525; Profil Komunitas, Manumera, Turiscai |
|----------------|----------|--------------------------|---|-----------------------------------|---|

| | | | | | |
|------------------|----------|------------------------------------|---|------------------|--|
| João Dias | Delegado | Aimoulako, Fahinehan, Januari 1979 | Februari 1979; dipukuli sampai mati di Manumera | Hansip/Linud 100 | HRVD 3491, 3790 ; Profil Komunitas, Manumera, Turiscai |
| Tome | Delegado | | 1979; dibunuh oleh Hansip di Fatuafaelaran, Turiscai | Hansip | Profil Komunitas, Beremeana, Turiscai |
| Lequibere | | | 1979; dibunuh oleh Hansip | Hansip | Profil Komunitas, Beremeana, Turiscai |
| Antonio Monteiro | | | 1979; dibunuh oleh Hansip | Hansip | Profil Komunitas, Beremeana, Turiscai |
| Valente Soares | | | Februari 1979; dibunuh di Manumera | Linud 100 | HRVD 3491, 3790 |
| Mauhalik | | | Februari 1979; dibunuh di Manumera | Linud 100 | HRVD 3491, 3790 |
| Nidal | | | Februari 1979; dibunuh di Manumera | Linud 100 | HRVD 3491, 3790 |
| Armindo Godinho | | | 1979; ditembak mati di Mindelo | Hansip | Profil Komunitas, Manumera, Turiscai |
| Berehunuk | | Foholau, Turiscai, Februari 1979 | 1979; ditembak mati di Datarua, Fahinehan | Hansip | Profil Komunitas, Manumera, Turiscai |
| Beremalik | | Foholau, Turiscai, Februari 1979 | 22 Februari 1979; 1979; ditembak mati di Sungai Saibololo di Foholau, Turiscai. | Hansip | Wawancara CAVR dengan Felimina Soares; HRVD 6440 |
| Bere Leki | | Foholau, Turiscai, Februari 1979 | 22 Februari 1979; ditembak mati di Sungai Saibololo di Foholau, Turiscai, oleh Hansip | Hansip | Wawancara CAVR dengan Felimina Soares; HRVD |
| Ta Mali | | Foholau, Turiscai, Februari 1979 | 22 Februari 1979; ditembak mati di Sungai Saibololo di Foholau, Turiscai, oleh Hansip | Hansip | Wawancara CAVR dengan Felimina Soares; HRVD |
| Mau Leki | | Foholau, Turiscai, Februari 1979 | 22 Februari 1979; ditembak mati di Sungai Saibololo di Foholau, Turiscai, oleh Hansip | Hansip | Wawancara CAVR dengan Felimina Soares; HRVD |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------------------|---|--------|---|
| Mau Leki | | Foholau, Turiscai, Februari 1979 | 22 Februari 1979; ditembak mati di Sungai Saibololo di Foholau, Turiscai, oleh Hansip | Hansip | Wawancara CAVR dengan Felimina Soares; HRVD |
| Maubere | | Foholau, Turiscai, Februari 1979 | 22 Februari 1979; ditembak mati di Sungai Saibololo di Foholau, Turiscai, oleh Hansip | Hansip | Wawancara CAVR dengan Felimina Soares; HRVD |
| Maubere | | Foholau, Turiscai, Februari 1979 | 22 Februari 1979; ditembak mati di Sungai Saibololo di Foholau, Turiscai, oleh Hansip | Hansip | Wawancara CAVR dengan Felimina Soares; HRVD |
| José | | Foholau, Turiscai, Februari 1979 | 22 Februari 1979; ditembak mati di Sungai Saibololo di Foholau, Turiscai, oleh Hansip | Hansip | Wawancara CAVR dengan Felimina Soares; HRVD |
| Dua orang lagi | | Foholau, Turiscai, Februari 1979 | 22 Februari 1979; ditembak mati di Sungai Saibololo di Foholau, Turiscai, oleh Hansip | Hansip | Wawancara CAVR dengan Felimina Soares; HRVD |
| Sebastiao | | Foholau, Turiscai, Februari 1979 | 23 Februari 1979; ditembak mati di Hulala, Liurai antara Foholau dan Turiscai | Hansip | Wawancara CAVR dengan Felimina Soares; HRVD |
| Maubere | | Foholau, Turiscai, Februari 1979 | 23 Februari 1979; ditembak mati di Hulala, Liurai antara Foholau dan Turiscai | Hansip | Wawancara CAVR dengan Felimina Soares; HRVD |
| Maubere | | Foholau, Turiscai, Februari 1979 | 23 Februari 1979; ditembak mati di Hulala, Liurai antara Foholau dan Turiscai | Hansip | Wawancara CAVR dengan Felimina Soares; HRVD |

Fatuberliu

| | | | | | |
|---------|----------|--|---|--|--|
| Berleki | Falintil | | Dibunuh, Saluki, Fatuberliu, 1978 | | |
| Marubi | Falintil | | Menghilang setelah ditangkap oleh ABRI di Wailuhu, Fatuberliu, 1978 | | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------------------------|---|----------------|---|
| Antonio | Falintil | | Menghilang setelah ditangkap oleh ABRI di Wailuhu, Fatuberliu, 1978 | | |
| Berloi | Falintil | | Menghilang setelah ditangkap oleh ABRI di Wailuhu, Fatuberliu, 1978 | | |
| Adriano Gomes | | Ditangkap di Aicora, Alas, 1978 | Dibunuh oleh Hansip di Laututo, Fahinehan | Hansip | HRVD 4776 |
| Bi-Luis | | Ditangkap di Aicora, Alas, 1978 | Dibunuh oleh Hansip di Laututo, Fahinehan | Hansip | HRVD 4776 |
| Cristiano da Costa | | Ditangkap di Aicora, Alas, 1978 | Dibunuh oleh Hansip di Laututo, Fahinehan | Hansip | HRVD 4776 |
| Francisco da Costa | | Ditangkap di Aicora, Alas, 1978 | Dibunuh oleh Hansip di Laututo, Fahinehan | Hansip | HRVD 4776 |
| Ijimenio da Costa | | Ditangkap di Aicora, Alas, 1978 | Dibunuh oleh Hansip di Laututo, Fahinehan | Hansip | HRVD 4776 |
| Inacio da Costa | | Ditangkap di Aicora, Alas, 1978 | Dibunuh oleh Hansip di Laututo, Fahinehan | Hansip | HRVD 4776 |
| Jaimito | | Ditangkap di Aicora, Alas, 1978 | Dibunuh oleh Hansip di Laututo, Fahinehan | Hansip | HRVD 4776 |
| Lekibere | | Ditangkap di Aicora, Alas, 1978 | Dibunuh oleh Hansip di Laututo, Fahinehan | Hansip | HRVD 4776 |
| Maubere | | Ditangkap di Aicora, Alas, 1978 | Dibunuh oleh Hansip di Laututo, Fahinehan | Hansip | HRVD 4776 |
| Arneu | Falintil | Ditangkap di Fatuberliu, 1979 | Dipukuli sampai mati di pangkalan Kopassandha di Fatuberliu | Kopassandha | HRVD 3018 |
| Ricardo Lobato | | | Ditembak mati oleh ABRI dekat rumah di Betun Laku, Clacuc, Fatuberliu, 1979 | | HRVD 3449 |
| Humberto Hornai | Komandan Komi | | Februari 1979; ditembak mati di Welalika, Fatuberliu | Hansip/Koramil | HRVD 3464; Profil Komunitas Caicasa, Fatuberliu |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--------------------------|---|
| Augusto de Jesus | Komandan, Armas Brancas | | Februari 1979; ditembak mati di Welalika, Fatuberliu | Hansip/Koramil | HRVD 3464; Profil Komunitas Caicasa, Fatuberliu |
| Francisco Ximenes | Komandan Peleton | | Februari 1979; ditembak mati di Welalika, Fatuberliu | Hansip/Koramil | HRVD 3464; Profil Komunitas Caicasa, Fatuberliu |
| José Ximenes | Povo | | Februari 1979; ditembak mati di Welalika, Fatuberliu | Hansip/Koramil/Linud 100 | HRVD 3464, 3455; Profil Komunitas Caicasa, Fatuberliu |
| Luis de Andrade (Amatuak) | Komandan Kompil | Aidikmean Tutun, Alas | 8 April 1979; dibunuh di Kota lama Fatuberliu (Welaloho?) | Hansip/Koramil | HRVD 3464; Profil Komunitas Caicasa, Fatuberliu |
| Jorge da Costa (Jorge de Jesus) | Komandan | Aidikmean Tutun, Alas | 5 April 1979; dibunuh di Kota lama Fatuberliu (Welaloho?) | Hansip/ABRI | Profil Komunitas, Fatucahi, Fatuberliu |
| Pedro Abilio | Prajurit | Aidikmean Tutun, Alas | 1979; dibunuh di Kota lama Fatuberliu (Welaloho?) | Hansip/ABRI | Profil Komunitas, Fatucahi, Fatuberliu |
| Hilario | Komandan, Armas Brancas | Aidikmean Tutun, Alas | 1979; dibunuh di Kota lama Fatuberliu (Welaloho?) | Hansip/ABRI | Profil Komunitas, Fatucahi, Fatuberliu |
| Joaquim Magalhaes | Komandan Kompil | Aidikmean Tutun, Alas | 1979; dibunuh di Kota lama Fatuberliu (Welaloho?) | Hansip/ABRI | Profil Komunitas, Fatucahi, Fatuberliu |
| Martins da Costa | Falintil | Aidikmean Tutun, Alas | 1979; dibunuh di Kota lama Fatuberliu (Welaloho?) | Hansip/ABRI | Profil Komunitas, Fatucahi, Fatuberliu |
| João Cairo | Falintil | Aidikmean Tutun, Alas | 1979; dibunuh di Kota lama Fatuberliu (Welaloho?) | Hansip/ABRI | Profil Komunitas, Fatucahi, Fatuberliu |
| Borfiri | | Aidikmean Tutun, Alas | 1979; dibunuh di Kota lama Fatuberliu (Welaloho?) | Hansip/ABRI | Profil Komunitas, Fatucahi, Fatuberliu |
| Webere | | Aidikmean Tutun, Alas | 1979; dibunuh di Kota lama Fatuberliu (Welaloho?) | Hansip/ABRI | Profil Komunitas, Fatucahi, Fatuberliu |
| Tetiseran | | Aidikmean Tutun, Alas | 1979; dibunuh di Kota lama Fatuberliu (Welaloho?) | Hansip/ABRI | Profil Komunitas, Fatucahi, Fatuberliu |
| Berkoli | | Aidikmean Tutun, Alas | 1979; dibunuh di Kota lama Fatuberliu (Welaloho?) | Hansip/ABRI | Profil Komunitas, Fatucahi, Fatuberliu |

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|---|-------------|---|
| João Abílio Fernandes | | | 1979; dibunuh, Fatuberliu | | AI (1985) |
| João Raul (João Gentio) | | | 1979; dibunuh, Fatuberliu | | AI (1985) |
| Moises Tilman de Araújo | | | 1979; hilang, Fatuberliu | | AI (1985) |
| Luis Alves | | | 1979; dibunuh di pos Btn 643 di Aidiklaran, Fatukmutin, Caicasa, Fatuberliu | Btn 643 | HRVD 3470 |
| Francisco Ximenes | | Caicasa, Fatuberliu | 1979; ditembak mati oleh Linud 100 | Linud 100 | HRVD 3455 |
| Tobias da Costa | | Fatucahi, Fatuberliu, Februari 1979 | 1979; hilang saat dalam tahanan Btn 745 | Btn 745 | HRVD 3424 |
| Caetano de Araújo | | Fatucahi, Fatuberliu, Februari 1979 | 1979; hilang saat dalam tahanan Btn 745 | Btn 745 | HRVD 3424 |
| Martins | | Fatucahi, Fatuberliu, Februari 1979 | 1979; hilang saat dalam tahanan Btn 745 | Btn 745 | HRVD 3424 |
| João Marmede | | Fatucahi, Fatuberliu, Februari 1979 | 1979; hilang saat dalam tahanan Btn 745 | Btn 745 | HRVD 3424 |
| Antonio Fernandes | Komandan Batalion | Welamusa, Fatucahi, Fatuberliu, Desember 1978/ awal 1979 | Dibunuh oleh Hansip di Kota Fatuberliu | ABRI/Hansip | HRVD 3424, 7021, Profil Komunitas, Clacuc, Fatuberliu |
| Zaulino Borges Torazao | Komandan | Welamusa, Fatucahi, Fatuberliu, Desember 1978/ awal 1979 | Dibunuh oleh di Kota Fatuberliu | ABRI/Hansip | HRVD 3424; Profil Komunitas, Clacuc, Fatuberliu |
| Marcos da Costa Fernandes | Assistente | Welamusa, Fatucahi, Fatuberliu, Desember 1978/ awal 1979 | Dipukuli sampai mati oleh Hansip di Kota Fatuberliu | ABRI/Hansip | HRVD 3482, 3278: Profil Komunitas, Clacuc, Fatuberliu |
| Francisco Fernandes | Komandan | Welamusa, Fatucahi, Fatuberliu, Desember 1978/ awal 1979 | Dibunuh oleh Hansip di Kota Fatuberliu | ABRI/Hansip | Profil Komunitas, Clacuc, Fatuberliu |

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|---|
| Luis Ximenes | Falintil | Menyerah di Aubaha, Clacuc, Fatuberliu, 1979 | Dibunuh oleh Hansip di puncak Gunung Clacuc, 1979 | Hansip | HRVD 3487, 3488 |
| Carlos Carlito | | Menyerah di Aubaha, Clacuc, Fatuberliu, 1979 | Dibunuh oleh Hansip di puncak Gunung Clacuc, 1979 | Hansip | HRVD 3487, 3488 |
| Francisco Lopes | Komandan Peleton | 1979 | Dibunuh oleh Hansip di Fatuk Mutin, Welaluhu, Fatuberliu Lama | ABRI/Hansip | HRVD 3471 |
| Francisco da Cruz | Komandan | Riamori, 1979 | Dibunuh oleh Linud 100 di Riamori | Linud 100 | HRVD 3474, 3492 |
| João Baptista | | 1979 | Dibunuh | ABRI | HRVD 3492 |
| João Tariri | | Caicasa, Fatuberliu, 13 Januari 1979 | Hilang; dilaporkan dibunuh di Baberuk, Fatuberliu | Linud 100 | HRVD 3464 |
| Prudencio Maia | Colaborador Sektor Tengah bagian Utara | 15 April 1979; ditangkap oleh Linud 100 | Dibunuh di depan keluarganya pada 24 April di Fatubesi, Welaluhu, Caicasa, Fatuberliu oleh Hansip | Linud 100/ Hansip | HRVD 4030 |
| Felisberto Gouveia Leite | Perawat yang diperbantukan pada Comissão de Apoio e Solidaridade (CAS) | Januari 1979; tertangkap/ menyerah di Aituha/ Raimaliak, Alas? | Hilang Februari-Maret 1979 setelah dipindahkan dari kamp pemukiman kembali di Fahinehan ke tahanan Linud 100 di gereja Fahinehan, Fatuberliu; dilaporkan dibunuh di Ailui, Fahinehan | Linud 100 | HRVD 5759; Kesaksian Maria da Costa; Wawancara CAVR dengan Bernardo da Costa: AI (1985) |
| Alexandrina Amelia Augusta Pires Leite | Istri dari Felisberto | Januari 1979; tertangkap/ menyerah di Aituha/ Raimaliak, Alas? | Hilang Februari-Maret 1979 setelah dipindahkan dari kamp pemukiman kembali di Fahinehan ke tahanan Linud 100 di gereja Fahinehan, Fatuberliu; dilaporkan dibunuh di Ailui, Fahinehan | Linud 100 | HRVD 5759; Kesaksian Maria da Costa; Wawancara CAVR dengan Bernardo da Costa: AI (1985) |

| | | | | | |
|---|---|--|--|-----------|--|
| Maria Auxiliadora Filomena Pires Leite (Karilesu) | Anak dari Felisberto dan Alexandre Amelia; istri dari Rogerio Lobato; anggota CAS | Januari 1979; tertangkap/ menyerah di Aituha/ Raimaliak, Alas? | Hilang Februari-Maret 1979 setelah dipindahkan dari kamp pemukiman kembali di Fahinehan ke tahanan Linud 100 di gereja Fahinehan, Fatuberliu; dilaporkan dibunuh di Ailui, Fahinehan | Linud 100 | HRVD 5759; Kesaksian Maria da Costa; Wawancara CAVR dengan Bernardo da Costa: AI (1985) |
| Dulce Maria Pires Leite (Ililoe) | anak Felisberto dan Alexandre Amelia; anggota CAS | Januari 1979; tertangkap/ menyerah di Aituha/ Raimaliak, Alas? | Hilang Februari-Maret 1979 setelah dipindahkan dari kamp pemukiman kembali di Fahinehan ke tahanan Linud 100 di gereja Fahinehan, Fatuberliu; dilaporkan dibunuh di Ailui, Fahinehan | Linud 100 | HRVD 05759; Kesaksian Maria da Costa; Wawancara CAVR dengan Bernardo da Costa: AI (1985) |
| Rui Manuel Baptista Pires Leite | Anak dari Felisberto dan Alexandre Amelia | Januari 1979; tertangkap/ menyerah di Aituha/ Raimaliak, Alas? | Hilang Februari-Maret 1979 setelah dipindahkan dari kamp pemukiman kembali di Fahinehan ke tahanan Linud 100 di gereja Fahinehan, Fatuberliu; dilaporkan dibunuh di Ailui, Fahinehan | Linud 100 | HRVD 5759; Kesaksian Maria da Costa; Wawancara CAVR dengan Bernardo da Costa: AI (1985) |
| Maria de Fatima Baptista Pires | Anak dari Felisberto dan Alexandre Amelia | Januari 1979; tertangkap/ menyerah di Aituha/ Raimaliak, Alas? | Hilang Februari-Maret 1979 setelah dipindahkan dari kamp pemukiman kembali di Fahinehan ke tahanan Linud 100 di gereja Fahinehan, Fatuberliu; dilaporkan dibunuh di Ailui, Fahinehan | Linud 100 | HRVD 5759; Kesaksian Maria da Costa; Wawancara CAVR dengan Bernardo da Costa: AI (1985) |
| Aurea Fontes Gusmão (Olo Bere) | Anak angkat Felisberto dan Alexandre Amelia; anggota CAS | Januari 1979; tertangkap/ menyerah di Aituha/ Raimaliak, Alas? | Hilang Februari-Maret 1979 setelah dipindahkan dari kamp pemukiman kembali di Fahinehan ke tahanan Linud 100 di gereja Fahinehan, Fatuberliu; dilaporkan dibunuh di Ailui, Fahinehan | Linud 100 | HRVD 5759; Kesaksian Maria da Costa; Wawancara CAVR dengan Bernardo da Costa: AI (1985) |

| | | | | | |
|------------|----------|--|--|-----------|---|
| Domingos | pengawal | Januari 1979; tertangkap/ menyerah di Aituha/ Raimaliak, Alas? | Hilang Februari-Maret 1979 setelah dipindahkan dari kamp pemukiman kembali di Fahinehan ke tahanan Linud 100 di gereja Fahinehan, Fatuberliu; dilaporkan dibunuh di Ailui, Fahinehan | Linud 100 | Wawancara CAVR dengan Bernardo da Costa |
| Pedro Kulo | | Januari 1979; tertangkap/ menyerah di Aituha/ Raimaliak, Alas? | Hilang Februari-Maret 1979 setelah dipindahkan dari kamp pemukiman kembali di Fahinehan ke tahanan Linud 100 di gereja Fahinehan, Fatuberliu; dilaporkan dibunuh di Ailui, Fahinehan | Linud 100 | Wawancara CAVR dengan Bernardo da Costa |
| Cancio | | Januari 1979; tertangkap/ menyerah di Aituha/ Raimaliak, Alas? | Hilang Februari-Maret 1979 setelah dipindahkan dari kamp pemukiman kembali di Fahinehan ke tahanan Linud 100 di gereja Fahinehan, Fatuberliu; dilaporkan dibunuh di Ailui, Fahinehan | Linud 100 | Wawancara CAVR dengan Bernardo da Costa |

Same

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|--|---|--------|---|
| Pedro Maumanas | Komandan, Armas Brancas | Terluka dan ditangkap di Dolok, Alas oleh ABRI, 1978 | Dibunuh oleh ABRI di Betano, 1978 | ABRI | Profil Komunitas, Debu-Waen, Mahaquidan, Alas |
| Mali Mau | | Ditangkap di Likbau, Ulu, Same, 1978 | Dibunuh di tempat setelah ditangkap oleh Hansip | Hansip | HRVD 4918 |
| Mau Buti | Falintil | | Diambil dari rumah oleh Hansip atas perintah ABRI dan dibunuh di Bukuil Ulun, Rototu, Same, Februari 1978(9?) | | HRVD 4765 |
| Lelo Sea | Falintil | | Diambil dari rumah oleh Hansip atas perintah ABRI dan dibunuh di Bukuil Ulun, Rototu, Same, Februari 1978(9?) | | HRVD 4765 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|-------------|--------------------------------|
| Alcino da Costa Vidal | Fretilin delegado, Aldeia Biti-Makerek, Alas | | Dibunuh oleh ABRI pada 7 Agustus 1978 di Betano | ABRI | HRVD 5434 |
| Luis Gonzaga | | | Dibunuh oleh Hansip di Kota Same segera setelah menyerah, 1979 | Hansip | HRVD 4727, 4732 |
| Mário Fernandes | | | Dibunuh oleh Hansip di Kota Same segera setelah menyerah, 1979 | Hansip | HRVD 4727, 4732 |
| Quei No | Fretilin, kepala desa Tutuloro | | Dibunuh oleh ABRI pada 1979 di Daisua, Same | ABRI | HRVD 5421 |
| Kotimeta | | | Dibunuh oleh Hansip di Daisua, Same, 1979 | Hansip | Profil Komunitas, Daisua, Same |
| Kosteti | | | Dibunuh oleh Hansip di Daisua, Same, 1979 | Hansip | Profil Komunitas, Daisua, Same |
| Baresi | | | Dibunuh oleh Hansip di Daisua, Same, 1979 | Hansip | Profil Komunitas, Daisua, Same |
| Daukolik | | | Dibunuh oleh Hansip di Daisua, Same, 1979 | Hansip | Profil Komunitas, Daisua, Same |
| Raimundo | | | Dipukuli hingga mati oleh Hansip di Betano, 1979 | Hansip | HRVD 4091 |
| Sekitar 20 orang | | | Hilang dari gedung sekolah Same, 1979 | Hansip/ABRI | HRVD 5408 |

315. Pada akhir 1978 banyak penduduk dari Subdistrik Turiscái, Same, dan Fatuberliu telah melarikan diri ke Subdistrik Alas, untuk menghindari pasukan pendudukan Indonesia. Selama bertahun-tahun sejak invasi, banyak penduduk desa mengambil jalan berliku, termasuk melalui jalan berliku arah barat ke Gunung Kablaki dan arah timur ke Lequidoe, sebelum mencapai Alas. Penduduk Alas sendiri banyak yang tetap tinggal di Alas sepanjang tahun-tahun sesudah invasi, walaupun sesudah ABRI memasuki Betano pada awal 1976, banyak penduduk yang melarikan diri ke utara dan barat, ke daerah-daerah pegunungan, sebelum kembali lagi ke Alas saat terjadi serangan Indonesia pada 1978. Penduduk Alas juga membengkak oleh orang-orang yang datang dari distrik-distrik lain termasuk dari Aileu, Manatuto, Ainaro, Dili, Liquiça, dan Viqueque.³²⁹ Dalam penyerahan diri atau penangkapan pada akhir

1978 dan awal 1979, banyak orang dari Turiscaí, Same, dan Fatuberliu, dikembalikan ke *postos* subdistrik, tempat mereka dikonsentrasikan di bawah pengawasan ABRI. Namun sangat banyak orang dari luar yang tidak dikembalikan ke subdistrik mereka sendiri, melainkan dipaksa tetap tinggal di Alas. Konsentrasi paling besar dari mereka itu terletak di Uma Metan di lereng Gunung Lebos. Awal 1979 detasemen campuran pasukan ABRI menahan sekitar 8.000 pengungsi dari semua daerah di Uma Metan. (Lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan.)

316. Menyusul penyerahan diri dan penangkapan-penangkapan pada akhir 1978 dan awal 1979, sejumlah besar orang dibunuh atau hilang di Manufahi. Selama penelitiannya, Komisi mendapat nama 140 orang dari semua subdistrik di Manufahi, yang telah dibunuh atau hilang dalam periode ini. Jumlah terbesar yang meninggal terjadi di Subdistrik Alas, terutama di atau sekitar Uma Metan. Subdistrik Fatuberliu diyakini merupakan tempat dengan jumlah pembunuhan terbanyak kedua di distrik itu.* Dalam tiap subdistrik di Manufahi, kelompok-kelompok khusus Hansip yang bertindak atas perintah satuan-satuan ABRI menjadi pelaku langsung dari banyak pembunuhan yang dilaporkan kepada Komisi. Sejumlah besar korban ialah orang-orang yang aktif dalam Resistansi sebagai pimpinan Fretilin atau komandan Falintil.

Alas

317. Menurut informasi yang diterima Komisi, beberapa kelompok orang dieksekusi di atau hilang dari Uma Metan tidak lama sesudah mereka menyerah atau tertangkap pada awal 1979.†

318. Komunitas Manus keluar dari hutan pada Februari 1979 dan menyerahkan diri di daerah Tutuloro di Alas. Tidak lama kemudian Hansip yang dipimpin oleh Capela Ferrão mengambil empat orang, yaitu Duarte Almeida, João da Silva, Martins Fernandes, dan Remigio Baptista. Mereka dibawa dari Uma Metan dan hilang. Orang kelima, Luis Monteiro, melarikan diri dan bersembunyi di Hato-Udo (Ainaro), tetapi berhasil ditemukan oleh M249 serta anakbuahnya dan dibunuh.‡330

* Walaupun di Subdistrik Same relatif tidak banyak kasus, namun terdapat juga beberapa kasus. (Lihat Pernyataan HRVD 7021, 4765, 4727, dan 4732; dan CAVR, Profil Komunitas Desa Daisua, Subdistrik Same, Distrik Manufahi (3 Juli 2003). Jumlah kasus yang relatif kecil dilaporkan terjadi di Same barangkali dapat diterangkan karena kedekatannya dengan Uma Metan, tempat sejumlah korban dari Same di-laporkan telah dipindahkan.

† Selain kelompok-kelompok yang kasusnya diuraikan di bawah, kasus perorangan yang dieksekusi atau hilang juga dilaporkan kepada Komisi, misalnya hilangnya komandan Força Defesa (FADE, Armas Brancas) di Alas, Pedro Matumanas [CAVR, Profil Komunitas, Debu-Waen, Mahaquidan (Subdistrik Alas, Distrik Manufahi) 3 Desember 2003] dan eksekusi José Nascimento Pires, yang menurut laporan diambil oleh Hansip, dan dibawa berpatroli ke Turiscaí, dan di sana ia ditembak mati [Pernyataan HRVD 0802, 3433 dan 3442].

‡ Pembunuhan empat orang ini tampaknya merupakan kelanjutan dari siklus kekerasan yang berasal dari masa perang saudara. Ayah M249, M254, seorang pemimpin UDT di Alas, diduga terlibat dalam pembunuhan 11 aktivis Fretilin di Wedauberek pada 27 Agustus 1975 (Alas, Manufahi). Ketika Fretilin menguasai Alas pada awal September 1975, mereka menangkap M254. Ia berhasil meloloskan diri/ tetapi ditemukan oleh sekelompok aktivis Fretilin, termasuk M255, M256, dan M257, dan dibunuh [lihat bagian 7.2.4.5, di atas, dan Pernyataan HRVD 1585, 1597, 1599, dan 3426].

319. Sekelompok orang, sekurang-kurangnya 12 tokoh Fretilin dan komandan Falintil dari Subdistrik Same dan Alas, dilaporkan telah dieksekusi di Uma Metan setelah tertangkap pada Maret 1979. Mereka itu adalah Antonio Cepeda, Sekretaris Zona Same; Antonio Lisboa, komandan peleton Falintil; Luis Marçal, sekretaris Desa Letefoho (Same); José Henrique, komandan kompi Falintil; Mateus Cortereal, komandan Zona Same; Jaime Sarmiento, komandan Zona Maubisse; Pedro Cortereal, sekretaris Desa Hola Rua (Same); dan Martinho Cortereal, komandan peleton; Armando da Silva; Jaime; Vidal; dan Luciano.

320. Menurut laporan, mereka semua dibawa ke Kodim di Same setelah penangkapan, dan beberapa hari ditahan di sana. Selama di tahanan Kodim Same dilaporkan mereka disiksa oleh Komandan Kodim, Letnan Kolonel M250, dan serdadu-serdadu Kopassandha. Kemudian mereka dipindahkan ke bawah pengawasan Komandan Kopassandha di Uma Metan, Kapten M251. Dari sana mereka diserahkan pada tim Hansip yang dipimpin oleh M249, dan dieksekusi.³³¹

321. Secara terpisah sekelompok anggota Falintil dari Alas juga dilaporkan dibunuh di atau dekat Uma Metan. Mereka itu termasuk João Bosco Fernandes, *colaborador* untuk sektor Alas; Placido da Costa, Komandan Kompi Falintil; Hepelito Fernandes, komandan peleton; Benjamin da Costa, seorang komandan; Isidoro Fernandes, anggota Falintil; dan Antonio Vicente, wakil komandan Zona.³³²

322. Di antara mereka yang terakhir menyerah di Subdistrik Alas ialah Adjunto Mausiri (José Maria), anggota Komite Sentral Fretilin, Eduardo dos Anjos (Kakuk), dan seorang pemimpin OPMT berumur 18 tahun, Siri Lou (Ermelita Coelho). Beberapa kelompok yang telah menyerah dikembalikan ke hutan untuk mencari mereka. Pada Maret 1979 tujuh orang diperintahkan oleh Infanteri Lintas Udara Batalion Infanteri 700 untuk kembali ke hutan dan mencari tiga orang lainnya. Mereka menemukan orang-orang yang dicari di suatu tempat bernama Kolkeu. Ketiganya terluca parah dan dengan mudah dibujuk agar menyerahkan senjata mereka. Helikopter dikirim untuk membawa mereka kembali ke Uma Metan. Menurut pernyataan yang diberikan kepada Komisi oleh Alfredo da Costa Coelho, ayah Ermelita Coelho, Ermelita telah dikirim untuk bersekolah pada Februari 1979, artinya ia sudah dibunuh bersama Adjunto Mausiri oleh Armed (Artileri Medan) 10 dan Hansip (M249, M252, dan M253) sesudah mereka diserahkan oleh Kopassandha.³³³

323. Pada Maret 1979, seorang Hansip, Luciano Ribeiro, diminta menyusun daftar yang menyebut nama para pemimpin Fretilin yang ada di antara orang-orang yang telah menyerah di Betano pada akhir 1978. Yang tertulis dalam daftar itu antara lain ialah: Francisco da Conceição, mantan *delegado*; Franco da Costa, mantan *assistente*; Paulino Verdial (Paulino Teli) mantan *delegado*, Martinho Pereira Aulaku, mantan *delegado*; dan Sebastião Nunes, wakil *delegado*. Untuk sementara waktu, beberapa orang di antara mereka dipekerjakan untuk membangun jalan bersama sekitar 200 orang yang telah menyerah; sedangkan beberapa orang lainnya, termasuk Sebastião Nunes, bekerja sebagai TBO dalam operasi militer di Alas, Tutuluru, dan Mindelo. Kemudian pada Maret, 13 orang, termasuk lima orang yang tertulis di daftar, dipanggil oleh *liurai*, M258, dan kepala desa, M31, dan diberitahu mereka akan disekolahkan.

Lima orang pulang mengambil pakaian. Sejak itu mereka tidak pernah lagi kelihatan. Menurut laporan mereka telah dibunuh di Sungai Karan Ulun di Betano.³³⁴

324. Pada sekitar 10 Maret 1979, kelompok lain, terdiri atas 14 orang yang, semuanya anggota Falintil, dibawa dari Betano ke Uma Metan. Termasuk di antaranya adalah tiga komandan seksi, Vidal da Cruz, Herminio da Costa (dari Selihasan), dan Estevão da Costa (dari Wedauberek), serta Maliuca, Francisco da Silva, dan Pedro Pereira. Menurut saksi mata, Vidal da Cruz dan Francisco da Silva dikeluarkan oleh tentara Indonesia dari serombongan orang tahanan yang sedang memotong rumput, diberitahu mereka harus pergi menebang kayu. Tidak lama sesudah istirahat, rombongan itu mendengar suara tembakan. Kemudian serdadu-serdadu tersebut memanggil Maliuca dan Pedro Pereira, dan sekali lagi rombongan mendengar suara tembakan. Hari berikut ketika sisa rombongan itu sedang menerima peta dan surat jalan sebagai persiapan pergi mencari Mausiri dan Kakuk, serdadu-serdadu itu mengambil Estevão da Costa dan Herminio da Costa. Ketika sisa rombongan meninggalkan Uma Metan untuk mencari Mausiri dan Kakuk, mereka mendengar suara tembakan dari arah Lebos.³³⁵

Turiscai

325. Pola pembunuhan bersasaran yang sama, yaitu terhadap orang-orang yang menyerah atau tertangkap, yang berkedudukan sebagai pemimpin dalam Fretilin dan Falintil, juga terjadi di Turiscai. Seorang *delegado*, Alucio Barbosa dari Foholau, dilaporkan ditembak mati oleh ABRI atau Hansip, karena mengeluh tentang sedikitnya jatah makan yang diberikan kepada mereka yang dipaksa bekerja untuk membangun jalan. Keluhan itu menimbulkan tuduhan bahwa ia “bermain politik”.³³⁶ Hansip setempat di bawah pimpinan M260 (lihat bagian tentang Pembantaian di Foholau, atas, dalam tabel Pembunuhan di Distrik Manufahi, setelah paragraf 314) juga dilaporkan memukul sampai mati *delegado* lain, João Dias, di Manumera, dan menembak mati dua aktivis Fretilin, Armindo Godinho dan Berehunuk.³³⁷

Fatuberliu

326. Di Fatuberliu, Koramil setempat, batalion-batalion Infanteri Lintas Udara, yaitu Batalion Infanteri Lintas Udara 100 dan Batalion Infanteri Lintas Udara 745, lagi-lagi dengan bantuan Hansip, mengeksekusi banyak orang, yang dahulu mempunyai hubungan dengan Fretilin atau Falintil, termasuk anggota-anggota biasa dari dua organisasi itu, dan bahkan juga orang-orang awam. Sesudah orang-orang dari subdistrik itu dikumpulkan di Fatuberliu, komandan Koramil dengan bantuan camat, M261, mengambil orang-orang yang diduga pemimpin Fretilin dan Falintil. Mereka yang diambil yaitu Umberto Hornai, seorang komandan kompi Falintil; Augusto de Jesus, komandan FADE; Francisco Ximenes, komandan peleton; dan José Ximenes, yang dikatakan sebagai “tokoh rakyat”. Mereka diserahkan kepada satuan Hansip dari Soibada (Manatuto), dipimpin oleh M262 dan M263, dan ditembak mati.³³⁸

327. Menurut laporan, satuan Hansip yang sama itu juga membunuh sekelompok lain campuran dari para komandan Falintil dan orang awam di Fatuberliu. Mereka

terdiri atas tiga komandan, Luis Amatuak, Jorgé da Costa, dan Hilario; tiga prajurit Falintil; dan empat lainnya, tiga di antaranya berumur 70 tahun.³³⁹

328. Suatu pola kekerasan hebat serupa yang ditujukan terutama, tetapi tidak semata-mata, pada anggota Fretilin dan Falintil serta keluarga mereka itu terlihat pada cerita-cerita dari Fatuberliu dalam kurun waktu itu. Jadi, misalnya:

- Sesudah serombongan orang Falintil menyerah di Fatucahi, Fatuberliu, Februari 1979, mereka dilucuti dan dipukuli. Empat orang di antaranya, Caetano de Araújo, Tobias da Costa, Martins, dan João Marmede, dilaporkan bahwa, sesudah memberi informasi palsu tentang keberadaan orang-orang Fretilin mereka diambil keluar dan hilang.³⁴⁰
- Kelompok pemimpin Fretilin dan Falintil lain, terdiri atas seorang *assistente* Marcos da Costa; komandan batalion, Antonio Fernandes; dan dua komandan lain lagi, Zaulino Torrezão dan Francisco Fernandes; ditangkap di Wemerek (Alas) dan dikirim ke Fatuberliu. Di sana, laporan mengatakan mereka dibunuh oleh Hansip yang dipimpin oleh M262. Menurut pernyataan yang diberikan kepada Komisi Marcos diberitahu oleh para penangkapnya untuk mengantar surat kepada M262. Ketika ia menyerahkan surat itu, ia dipukul dengan martil di dahi dan telinganya dipotong, lalu ia disuruh makan telinganya dan beberapa jam kemudian ditembak mati.³⁴¹
- DO, yang berusia limapuluh tahun, seorang komandan Falintil, datang menyerah bersama keluarganya di Riamori (Fahinehan, Fatuberliu) pada 1979. Kepala desa, M270, mengatakan kepada personel dari Batalion Infanteri Lintas Udara (Linud Yonif) 100, bahwa sebagai komandan, DO harus dibunuh atau para perempuan anggota keluarganya diperkosa. Ia memang dibunuh. Tetapi sesudah itu Linud 100 berulang-ulang memerkosakan dua anak perempuan EN, sampai Linud 100 diganti oleh batalion lain, 643, pada 1980. Kepada dua anak perempuan yang diperkosa itu dikatakan bahwa mereka diperkosa karena ada satu orang di antara kakak mereka yang masih di hutan.³⁴²
- Pada 1979 Francisco Lopes, seorang komandan peleton, turun dari gunung untuk menyerahkan diri kepada TNI. Ia disuruh pulang. Kemudian dua orang Hansip dari Soibada membawa Francisco ke Fatuk Mutin (Welaluhu, Fatuberliu) dan di sana ia ditembak mati oleh M271.³⁴³
- Pada 15 April, Prudencio Maia, mantan *colaborador* Falintil untuk Sektor Tengah Selatan, ditangkap oleh pasukan Batalion Infanteri Lintas Udara 700. Sesudah sembilan hari ditahan, ia diizinkan pulang ke rumahnya di Fatuberliu untuk mengunjungi keluarganya. Pada 24 April, Hansip, dipimpin M271 dan M263, datang ke rumah Prudencio dan membawanya ke suatu tempat bernama Fatubessi (Welaluhu, Caicasa, Fatuberliu). Di sini tujuh orang Hansip itu memerintahkannya membalikkan tubuh dan kemudian mereka menembaknya dari belakang. Keluarga Prudencio dibawa untuk menyaksikan pembunuhan itu.*

* Pernyataan HRVD 04030. Pembunuhan-pembunuhan lain di Fatuberliu dilaporkan dalam Pernyataan

Eksekusi massal di Fahinehan

Pada Februari atau Maret 1979, 12-14 orang, termasuk tujuh orang dari satu keluarga, dieksekusi di Ailui, sekitar satu kilometer dari kamp pemukiman Fahinehan di Fatuberliu. Di antara mereka yang dibunuh adalah seorang ayah, Felisberto Gouveia Leite, yang bekerja sebagai perawat di hutan, dan tiga anak perempuannya yang bekerja pada Comissão de Apoio e Solidaridade (CAS; Komite Solidaritas dan Bantuan), yang menyediakan bantuan pangan bagi mereka yang memerlukannya di hutan (lihat Bab 7.4: Kemiskinan dan Pemindahan Paksa). Salah seorang putri Felisberto, Maria Auxiliadora Filomena Pires, adalah istri Rogério Lobato. Komisi menerima laporan bahwa sampai dieksekusi, para putri Felisberto itu hidup dengan siapa saja di kamp pemukiman Fahinehan sejak mereka menyerah pada Januari 1979. Komisi juga menerima laporan, bahwa prajurit-prajurit Indonesia itu terus-menerus mengganggu Filomena, berusaha membujuknya agar mau menjadi istri ABRI, tapi ia terus-menerus menolak bujukan mereka. Suatu hari keluarga itu diberitahu akan dibawa ke Dili dengan pesawat terbang. Mereka dikawal keluar dari kamp oleh pasukan Linud Yonif 100. Ketika orang-orang di kamp mendengar suara tembakan, mereka berpikir tidak ada yang aneh, hanya ABRI yang menembaki kerbau-kerbau lagi. Komisi menerima nama sepuluh orang yang telah ditembak mati:

Felisberto Gouveia Leite, suami

Alexandrina Amelia Augusta Pires Leite, istri

Maria Auxiliadora Filomena Pires Leite (Karilesu),
anak, istri Rogério Lobato

Dulce Maria Pires Leite (Ililoe), anak

Rui Manuel Baptista Pires Leite, anak

Maria de Fatima Baptista Pires Leite, anak

Aurea Fontes Gusmão (Olo Bere), anak angkat

Domingos, pengawal keluarga

Pedro Kulo, “orang Portugis”

Cancio – “Portugis”.³⁴⁴

HRVD 03464, 03470 dan 03455.

Uatolari, Viqueque

Tabel 16: Orang yang dilaporkan kepada CAVR telah dibunuh/dihilangkan setelah penahanan di Uatolari, Nov-Des 1978 dan Mar-Apr 1979

| Nama | Jabatan | Tempat asal | Tanggal terbunuh/hilang | Keadaan pembunuhan/penghilangan |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Acacio | | | | |
| Acacio de Carvalho | Fretilin/OPJT Matahoi | Afaloicai | | |
| Adelino de Carvalho | Pasukan Fretilin | Afaloicai, Lena | Januari-April 1980 (1979?) | |
| Adolfo | | Uato Carbau | | |
| Afonso | | Matahoi | 1979 | |
| Afonso Barreiro | | | 1983 | |
| Afonso Henrique Freitas | | Matahoi | | |
| Afonso Manu Uai | | Ossu | Feb-79 | |
| Afonso Menezes | Fretilin | | 25/11/78 | |
| Agapito Aquino | Falintil | | 15/3/79 | |
| Alfredo | Fretilin | Afaloicai, Uatolari | Januari-April 1980 (1979?) | |
| Alfredo Pereira | | | Feb-79 | |
| Alfredo Ribeiro | | | 23/11/78 | |
| Amaro | | Bobo Laco, Macadique | | |
| Amaro Lourenço Ximenes | Falintil | Macadique | | |
| Amelia | | | 25/3/92 | |
| Antonio da Costa | | Ossu, Uaibobo | | |
| Antonio da Costa | | Afaloicai, Uatolari | | |
| Antonio do Rosario | | Afaloicai | | |
| Antonio Miguel | | Ossu, Uaibobo | | |
| Antonio Naco Lai | | | | |
| Armando | | Afaloicai, Uatolari | | |
| Armindo | | Afaloicai | | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Bobu | | Aba Dere, Babulo | 1978 | |
| Cai Mau | | Vessoru, Bahabuga | | |
| Cai Mau | | Aba Dere, Babulo | | |
| Cai Mau | | Macadique | | |
| Celestino | | Caidana Lari , Macadique | | |
| Chiquito | | Bai Uari, Matahoi | | |
| David Lebre | | Uato Carbau | Januari-April 1980 (1979?) | Tahanan/dihilangkan |
| David Loi Siba | Comandante Zona Uato Carbau | | 23/11/78 | dihilangkan |
| Domingos | | Uma Kiik, Uaitame | | |
| Domingos Hernani | | | Feb-79 | Penahanan (Ossu)/ dihilangkan |
| Domingos Rosario | | Afaloicai | 00/00/78 | pembunuhan |
| Domingos Torres | | Sana, Uaitame | | |
| Duarte da Costa | | | Jan-79 | pembunuhan |
| Eduardo | Falintil | | 1979 | Dibunuh di luar pertempuran |
| Ereleto | Fretilin | | 1976 | Penahanan/pembunuhan |
| Feliciano | Falintil | Sana, Uaitame | 1979 | penahanan/penyiksaan/ pembunuhan |
| Fernando da Silva | | Uaitame | | |
| Francisco Soares | | Matahoi | | |
| Gaspar | Fretilin | Uatolari | Januari-April 1979 | Penahanan/penghilangan |
| Gaspar | | Afaloicai, Uatulari | | |
| Gaspar | | Uai Cai, Afaloicai | | |
| Gaspar | | Bai Uari, Matahoi | | |
| Gaspar Pinto | Delegado | Matahoi | 25/11/78 | Penahanan/penyiksaan/ pembunuhan |
| Gaspar Raileki | | | Feb-79 | penahanan (Ossu)/ penghilangan |

| | | | | |
|--|-----------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Germano Fernandes | | Balabaciba, Vessoro | | |
| Gregorio | | Ossurua, Ossu | | |
| Gregorio Maulelo (Gregorio Cai Kuli Oho) | Delegado Baguia | Dari Caicoli-Ho Baguia | 1979 | Penahanan/penyiksaan/pembunuhan |
| Helena | OPMT | Afaloicai | | |
| Hermenegildo | | Sana, Uaitame | | |
| Ildefonso | | Uato Carbau | | |
| Isabel de Sousa | | Afaloicai | | |
| Jacinto | | Afaloicai, Uatolari | | |
| Jacob | | Nuno Malau, Afaloicai | | |
| Januario | | Nuno Malau, Afaloicai | | |
| Jeremias | | Bai Uari, Matahoi | | |
| Jeremias Amaral | | Matahoi | | |
| Joao | Falintil | Sana, Uaitame | 1979 | Penahanan/penyiksaan/pembunuhan |
| Joao | | Lia Sidi, Babulo | | |
| Joao Baptista | | Baha Buga, Vessoro | | |
| Joao Bercamas (Joao Berchmans) | | Matahoi | | |
| Joao de Menezes | | Ossocai Ua, Afaloicai | | |
| Joao Gamu Noko | | | Feb-79 | Penahanan (Ossu)/penghilangan |
| Joao Miguel | Delegado | Babulu, Liaside | 25/11/78 | Penahanan/penyiksaan/pembunuhan |
| Joao Soares | | Beli, Babulo | | |
| Jorge | | Afaloicai, Uatolari | | |
| Jorge Barros | | Macadique | | |
| José Samor | | | 1978? | Pembunuhan |
| Juliao Sarmento | | Baki Laco, Macadique | | |
| Julio Baptista Makikit | Fretilin | Uatolari | Januari-April 1980 (1979?) | Penahanan/penghilangan |

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Julio Pires | Delcom Builale | Afaloicai, Uatolari | 23/11/78 | Penghilangan |
| Julio Soares | | Osso Bubo, Afaloicai | | |
| Juvenal Inacio | | Viqueque | | |
| Kong Sung | | Baha O, Vessoro | | |
| Lafaek | Falintil | Uatolari | Januari-April 1980 (1979?) | Penahanan/penghilangan |
| Leao | | Uani Uma, Matahoi | | |
| Leao de Jesus | | Matahoi | | |
| Leao Ximenes | | Dari Sana, Uaitame | 1979 | Penahanan/penyiksaan/ pembunuhan |
| Lequede | Fretilin | | 1976 | Pembunuhan |
| Lequibere | | Macadique | | |
| Lequi-Tek | | | 1978 | |
| Lino | | Ossu | | |
| Lino Alokasa | | Ossu de Cima | | |
| Loi Cou | | Babulu, Abadere | | |
| Luis | | | 1976 | Pembunuhan |
| Luis | Falintil | | 1976 | Penahanan/Pembunuhan |
| Luis | Falintil | Uatolari | Januari-April 1980 (1979?) | Penahanan/penghilangan |
| Luis | | | 1978 | |
| Luis | | Uato Carbau | | |
| Luis | | Lacarato, Macadique | | |
| Luis Freitas | | Matahoi | | |
| Luis Loi Leki | | Matahoi | | |
| Luis Pinto | | Macadique | | |
| Luis Ualisakar | | Macadique | | |
| Manuel | Falintil | | 1976 | Penahanan/Pembunuhan |
| Manuel | | Lari, Afaloicai, Uatolari | | |
| Manuel | | Ua Sufa, Matahoi | | |
| Manuel Braga | | Goni Uro, Macadique | | |

| | | | | |
|-------------------|----------|------------------------|----------|-------------------------------------|
| Manuel da Costa | | Matahoi | | |
| Manuel da Silva | | | Feb-79 | Penahanan (Ossu)/ Penghilangan |
| Manuel Manezes | | | 1976 | Pembunuhan |
| Manuel Manumau | | Macadique | | |
| Manuel Manusu | | | Feb-79 | Penahanan (Ossu)/ Penghilangan |
| Manuel Soares | | Macadique | | |
| Manuel Uaisanua | | | Feb-79 | Penahanan (Ossu)/ Penghilangan |
| Mariano Loi Lequi | | Macadique | | |
| Mário | | Uai Cai, Afaloicai | | |
| Martins | | Lugasa, Viqueque | | |
| Mau Kili | | Matau, Vessoro | | |
| Mau Rubi | | Uatolari, Macadique | | |
| Miguel | | Ossu, Nahareka | | |
| Miguel | | Ua Sufa, Matahoi | | |
| Miguel | | Matahoi | | |
| Miguel Cai Rubi | | Macadique | | |
| Miguel da Silva | | Matahoi | | |
| Nau Rubi | | Macadique | | |
| Nogueira Freitas | | Uatolo, Matahoi | | |
| Oka | | | 1978 | Pembunuhan |
| Olokasa | Falintil | | Dec-78 | Penahanan/Pembunuhan |
| Palmira | | Matahoi | | |
| Paulo Freitas | | | 1976 | Penahanan/Pembunuhan |
| Pedro | | | 00/00/79 | Pembunuhan |
| Pedro Nahaloi | | | 00/00/79 | Pembunuhan |
| Ricardo | Falintil | Dari Sana, Uaitame | 1979 | Penahanan/penyiksaan/ pembunuhan |
| Roberto | | Matahoi, Uaniuma | | |
| Roberto Menezes | Falintil | Sana, Uaitame | 1979 | Penahanan/penyiksaan/ pembunuhan |
| Salvador da Silva | | Foho Mano, Uaitame | | |

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Saua Dara | | Matahoi | | |
| Sebastiao | | Uaitame | | |
| Sebastiao | | Caidana Lari Macadique | | |
| Sebastiao Alves da Silva | Delegado Matahoi | Matahoi | 23/11/79 | Penghilangan |
| Sebastiao Boruloi | | Vessoru, Baha O | | |
| Sebastiao Uatocai | | Macadique | | |
| Sequito | Assistente | | 25/11/78 | Penahanan/penyiksaan/pembunuhan |
| Silvino | Falintil | Uatolari | Januari-April 1980 (1979?) | Penahanan/penghilangan |
| Solan | Adjunto | Los Palos | Dec-78 | Penahanan |
| Tana Mota | | Dili | | |
| Tawameta | | Dili | | |
| Teofilo Duarte | | Matau, Vessoro | | |
| Valente | Falintil | Uatolari | Januari-April 1980 (1979?) | Penahanan/penghilangan |
| Valente | | Uato Carbau | | |

Sumber: Pernyataan HRVD No. 7278, 7450, 7451, 7441, 7528, 4185, 4200, 7459, 3145, 7485, 8069, 6804, 6010, 7331, 7528, dan 5252, 3145-2, 7278-4; Profil Komunitas Uaimori-Tul (Viqueque, Viqueque); Informação Sobre A Situação De Algumas Zonas de Timor Leste, Dili, 13 Mei 1982; dan Informaçoes, submisi Napoleão de Almeida kepada CAVR, 25 Mei 2004.

329. Komisi menerima nama sekitar 140 orang yang dieksekusi atau hilang sesudah ditahan di Uatolari. Mereka ditahan di satu atau dua tempat sebelum dieksekusi atau hilang: di Koramil Uatolari, sekolah dasar di zaman Portugis dan di sebuah rumah yang dahulu milik seorang Cina, Mo Tem-Po, dan telah diambil alih oleh Batalion 202 dan 721 sebagai markas Kotis (Komando Taktis), untuk tempat interogasi orang-orang yang telah tertangkap atau menyerah pada akhir 1978. Sekitar 300 orang dari Uatolari sendiri, dari bagian-bagian lain di Distrik Viqueque dan distrik-distrik lain, termasuk Dili dan Baucau, dipilih untuk ditahan sesudah mereka menyerah atau tertangkap. Tidak lama kemudian beberapa orang di antara mereka itu segera dieksekusi atau hilang.³⁴⁵ * Banyak dari mereka yang dibebaskan sesudah tiga bulan; dan yang lain tetap ditahan dan masih dalam tahanan sampai Maret-April 1979, ketika sebagian besar pembunuhan dan penghilangan terjadi.³⁴⁶ Pada Maret-April, ABRI memerintahkan penangkapan ulang pada para tawanan yang sudah dibebaskan, yaitu mereka yang punya posisi dalam struktur Fretilin dan Falintil, dan kemudian ABRI pun memulai serangkaian pembunuhan dan penghilangan.

* Selain orang-orang yang dieksekusi segera sesudah ditahan di Uatolari, juga terdapat kasus orang-orang segera dibunuh sesudah menyerah [lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 6804 dan 7363].

330. Beberapa dari tahanan ini dilaporkan telah dibawa ke tempat-tempat di luar Uatolari untuk dibunuh, termasuk ke Kodim di Viqueque dan Lacudala di Quelicai (Baucau), dan tahanan lainnya hilang. Menurut laporan pembunuhan-pembunuhan itu dimulai pada Maret, tetapi sangat besar kemungkinan pembunuhan terjadi pada April.³⁴⁷ Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan di berbagai tempat di Uatolari.

331. Dari perspektif lokal, dua peristiwa tampaknya telah memicu terjadinya pembunuhan. Pada Februari 1979 terjadi serangan Falintil di Salerin, empat orang Timor-Leste dan seorang serdadu Indonesia terbunuh dalam serangan itu.³⁴⁸ Tidak lama sesudah serangan, agaknya suatu pertemuan terjadi antara enam orang Timor-Leste yang telah menyerah November sebelumnya dengan Kalasa, komandan Falintil yang masih ada di hutan. Hansip dan para pejabat desa yang dilapori tentang adanya kemungkinan pertemuan tersebut, meneruskan laporan itu kepada ABRI.[†]

332. Kejadian ini memberi petunjuk pada ABRI bahwa Resistansi masih hidup di subdistrik itu dan mendapat dukungan dari rakyat Timor-Leste yang menyerah dan ditahan serta sudah dibebaskan dari tahanan. Namun, seperti di distrik-distrik lainnya, agaknya korban-korban itu dipilih bukan karena punya hubungan langsung dengan kegiatan resistansi akhir-akhir itu, tetapi karena dahulu, sebelum menyerah atau ditangkap, mereka anggota aktif Resistansi. Mereka termasuk orang-orang yang sudah terus ditahan sejak November sebelumnya. Misalnya, suatu malam pada Maret 1979, sembilan orang yang terdiri atas lima *delegados*, satu sekretaris *aldeia*, satu *assistente*, satu komandan Zona Falintil, dan seorang tokoh OPJT diambil dari tempat penahanan mereka dan tidak pernah kembali.[‡]

333. Eksekusi-eksekusi itu dimulai kira-kira saat pembunuhan dan penghilangan orang-orang yang dahulu aktif dalam Resistansi dan telah menyerah atau tertangkap juga tengah berlangsung di distrik-distrik lain. Menurut salah satu cerita, barulah

* Di antara mereka yang, menurut laporan, telah melewati pusat-pusat penahanan di Uatolari, ialah dua pemimpin senior Resistansi, Solan (Inácio Fonseca) dan Olakasa, kedua-duanya diduga sudah dieksekusi di Lacudala di Quelicai pada April-Mei 1979 [lihat bawah, dan Pernyataan HRVD 06093]. Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak mengatakan kepada Komisi, bahwa ia tahu Sera Key (Juvenal Inácio) sudah dibunuh di Uatolari. Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak ditangkap bersama Sera Key di Ossu awal 1979; ia kemudian melarikan diri dan mencari tahu tentang matinya Sera Key. [Wawancara CAVR dengan Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak, Dili, 9 Juni 2004]. Pembunuhan terhadap tahanan yang ditahan di Kodim Viqueque dilaporkan dalam Pernyataan HRVD 03602 oleh saksi yang juga dipindahkan dari Uatolari ke Kodim.

† Apakah pertemuan itu memang terjadi, agak meragukan. Menurut cerita Napoleão de Almeida, informasi tentang pertemuan itu datang dari dua orang yang ditangkap, yang rupanya sedang mencari kerbau untuk menggarap tanah mereka. Dua orang itu dibawa ke enam pemimpin desa dan berkata bahwa mereka tidak mencari kerbau, tetapi mencari "orang yang di hutan" (*ema ailaran*), dan tak sengaja melihat yang diduga sebagai pertemuan itu [Informações, Submisi Napoleão de Almeida pada CAVR, 25 Mei 2004]. Enam orang yang mereka nyatakan telah mereka lihat bicara pada komandan Falintil – Adelino de Carvalho, João Bercamas, Luis Uaisakar Lakarate, Sebastião da Silva, Manuel Braga, dan Julião Sarmento – adalah bekas pemimpin Fretilin atau komandan Falintil, yang menurut laporan sudah dibunuh atau hilang pada April 1979 [lihat Tabel di atas].

‡ Mereka itu: Adelino Umu Segue (*secretario de aldeia*), David Loisiba (komandan Zona Falintil, Uatu Carbau), Gregório Maulelo (*delegado*, Bagaia), Sebastião Alves da Silva (*delegado*, Matahoi), Acacio de Carvalho (OPJT Matahoi), Julio Pires (*delegado commissariado*, Builale), Sequito (*assistente*), Gaspar Pinto (*delegado*) dan João Miguel (*delegado*) [Pernyataan HRVD 07451].

pada 9 April eksekusi mulai benar-benar terorganisasi. Menurut laporan, pada saat itu Komandan Batalion 721 memanggil berkumpul para pemimpin setempat yang diangkat oleh pihak Indonesia. Pada kesempatan ini ia mengatakan kepada mereka untuk menahan kembali orang-orang yang November lalu telah turun dari Matebian. Mereka itu, walaupun tidak semua, sebagian besar sudah dibebaskan pada Januari. Pada pertemuan lain pada 15 April yang dihadiri oleh 63 anggota Hansip, para pejabat desa dan orang-orang Timor-Leste lainnya, Komandan Batalion 721 mengumumkan bahwa orang-orang Fretilin dan Falintil yang telah ditangkap kembali harus dibunuh.³⁴⁹ Para komandan ABRI mengaktifkan kembali tim-tim yang terdiri atas orang-orang Timor-Leste dan dibentuk untuk menginterogasi mereka yang tertangkap atau menyerah pada November 1978, dan memutuskan “apakah kita akan hidup atau mati”³⁵⁰.^{*} Lalu gelombang pembunuhan dimulai pada 15 April, dan berlanjut selama dua hari berikut di Uлуу, Uatolari, Lia Sidi, Saqueto, dan Beaçõ.[†]

334. Skala dan waktu eksekusi memberi kesan pada Komisi bahwa sementara faktor-faktor setempat jelas memainkan peran dalam keputusan untuk dilaksanakannya pembunuhan-pembunuhan itu, namun pelaksanaannya itu merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dan terkoordinasi secara sentral, dengan tujuan membasmi Resistansi sekali dan untuk selamanya.

335. Lucio Meneses Lopes, salah seorang di antara beberapa tawanan yang tidak pernah dilepas dari tempat penahanan sejak ia menyerah di Uatolari pada November 1978, selamat dari eksekusi massal di Uлуу. Ia menceritakan apa yang telah terjadi di depan Audiensi Publik Nasional Komisi tentang Pembantaian:

Dua orang Hansip membawa sebuah daftar nama-nama tahanan, dan memanggil mereka seorang demi seorang. Daftar ini diberikan kepada Hansip oleh tentara Indonesia...[N]ama saya tidak ada dalam daftar. Tetapi kemudian dua orang Hansip datang ke pusat penahanan, dan menambahkan nama saya di akhir daftar, yaitu dengan nomor 28. Mereka memanggil kami dan berkata: “Sekarang kita akan mencari Fretilin di hutan.”

Orang yang mengawal para tahanan ialah [sekarang ini masih di Kupang] dan [yang sudah meninggal di Kupang]. Di tengah jalan tidak terjadi sesuatu pada kami. Kadang-kadang Hansip itu

* Pada November 1978 ada tiga tim yang bekerja di markas Kotis di Uatolari: tim 10 orang sipil dipimpin oleh kepala desa Babulo, M272; tim 9 orang militer dipimpin oleh Camat Uatolari, M273; dan tim perempuan yang agaknya hanya terdiri dari satu orang saja, M277 [CAVR, Profil Komunitas untuk Desa-Desa Matahoi dan Macadique, Sub-distrik Uatolari, Distrik Viqueque]. Ketika tim-tim itu diaktifkan kembali, bulan Maret 1979, anggota tiga tim tersebut menginterogasi tahanan bersama-sama – dan diperlakukan dengan kejam [Pernyataan HRVD 03602].

† Informação Sobre A Situação De Algumas Zonas de Timor Leste, op.cit.; CAVR, Profil Komunitas Desa Matahoi, Sub-distrik Uatolari, Distrik Viqueque menunjukkan tempat eksekusi telah terjadi, seperti Uлуу, Munu-Malau, Beaçõ, Uai-Mahu dan Kaidawa Marak. CAVR, Profil Komunitas Desa Macadique, Sub-distrik Uatolari, Distrik Viqueque, menyebut tempat-tempat eksekusi adalah: Uлуу, Uatu Ila, Liasidi, Hunu Malau, Uatolari Leten, dan Beaçõ.

berjalan mendahului kami, dan kemudian kadang-kadang kami yang mendahului mereka, dan mereka mengikuti kami dari belakang. Kami berjalan selama dua jam di jalan menuju Uлуу. Ketika kami tiba di Uлуу, mereka menyerahkan kami kepada Batalion 721 ABRI. Ketika kami tiba di sana, Bapak [sepatah kata yang lazim dipakai orang Timor-Leste untuk menyapa tentara Indonesia] berkata: “Silakan istirahat dulu. Duduklah!” Kami semua duduk, [tetapi] seorang teman dan saya memutuskan untuk tetap berdiri. Lalu mereka membagi kami rokok Blue Ribbon. Bapak itu mulai bicara: “Sekarang kita akan pergi mencari Fretilin”...Sekitar 15 menit kemudian, mereka bicara lagi: “Sekarang kita akan berangkat dan mencari Fretilin.”

Kami berempat belas orang dibagi dalam dua kelompok. Tujuh dikirim ke Zona 17 Agustus, dan yang lain dibawa ke bukit. Kami mulai berjalan menuju suatu tempat, di mana tentara sudah siap di sana. Di tengah perjalanan teman saya, Adelino de Carvalho, yang bersama saya berkata: “Lopes, barangkali inilah saatnya kita akan mati.” Saya menjawab: “Hanya Tuhan bisa memutuskan, apakah kita akan hidup.” Ketika kami tiba di atas bukit, mereka [tentara Indonesia] memberi aba-aba pada kita: “Semua duduk! Lihat, di sana ada Fretilin!” Kami duduk. Tetapi saya tidak duduk di atas tanah. Saya hanya jongkok bersiap-siap, apabila sesuatu yang buruk terjadi. Tidak lama sesudah itu senjata mulai menyalak. Saya seketika itu melompat turun dari bukit. Mereka menghujani saya dengan peluru. Sebutir peluru menyerempet dan menggores kepala saya. Di bawah bukit saya sembunyi di sebuah ceruk di batu. Saya melihat mereka [tentara itu] mencari-cari saya. Tapi mereka tidak menemukan saya.³⁵¹

Tabel 17: Pembunuhan di Distrik Manatuto, Februari-April 1979

| Nama | Jabatan | Tanggal penangkapan/ penyerahan diri | Tempat | Tanggal pembunuhan/ penghilangan | Tempat pembunuhan/ penghilangan | Pelaku (-pelaku) |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Barique | | | | | | |
| Francisco Barros | Wakil Sekretaris Zona | 9/3/1978 | Casohan, Barique | Segera setelah penangkapan | Casohan, Barique | |
| | | 9/3/1978 | Casohan, Barique | Segera setelah penangkapan | Casohan, Barique | |
| Laleia | | | | | | |
| João Baptista | Sekretaris Zona | 3/1/1979 | Laleia | Segera setelah penangkapan | Raimea | Btn 745 |
| | | | | Segera setelah penangkapan | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------|--------|----------------------------|---------------------------|---------|
| Antonio da Costa | Komandan Kompi | 3/1/1979 | Laleia | Segera setelah penangkapan | Tidak diketahui (TBO dis) | Btn 745 |
| Salvador da Costa | Komandan Kompi | 3/1/1979 | Laleia | | Tidak diketahui (TBO dis) | ? |
| Valdemiro Andre Viegas | Komandan Kompi | 3/1/1979 | Laleia | | Tidak diketahui (TBO dis) | ? |
| Francisco Ximenes | Komandan Kompi | 3/1/1979 | Laleia | | Tidak diketahui (TBO dis) | ? |
| Mariano da Sousa | Komandan peleton/ Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |
| Clementino José Branco Ximenes | Komandan peleton/ Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |
| João de Brito Ximenes | Komandan peleton/ Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |
| Gregorio Soares | Komandan seksi/Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |
| Antonio Rufino da Costa | Komandan seksi/Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |
| Felisberto Viegas | Wakil Sekretaris Zona/ Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |
| João Viegas | OPJT, Responsavel da Zona/ Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |
| Sebastião Gusmão | Sekretaris Desa/Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |
| Mario Ximenes | Kepala Desa/Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |
| Domingos Bartos Ximenes | Anggota Falintil / Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |
| Sergio da Costa Gusmão | Anggota Falintil / Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |
| Felipe da Costa | Anggota Falintil / Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|--|---------------|------------------------------------|-------------|
| Filomeno Gusmão | Anggota Falintil / Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |
| José Bento | Anggota Falintil / Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |
| José Vong | Anggota Falintil / Hansip | 1/1/1979 | | Februari 1979 | Laleia? | Btn 745 |
| Paul Malati Soares | | | | Februari 1979 | Laleia | Btn 745/631 |
| Salvador Ximenes | | | | Februari 1979 | Laleia | Btn 745/631 |
| Salvador Ximenes | Delegado de Suco | | | 4/1/1979 | Karkida (di jalan Laleia-Manatuto) | ? |
| Antonio Virgilio da Costa Freitas | tentara | | | 4/1/1979 | Karkida (di jalan Laleia-Manatuto) | ? |
| Manuel Boavida | tentara | | | 4/1/1979 | Karkida (di jalan Laleia-Manatuto) | ? |
| Francisco Inacio | tentara | | | 4/1/1979 | Karkida (di jalan Laleia-Manatuto) | ? |
| Tomas Bonaparte Soares | tentara | | | 4/1/1979 | Karkida (di jalan Laleia-Manatuto) | ? |
| Antonio Soares | tentara | | | 4/1/1979 | Karkida (di jalan Laleia-Manatuto) | ? |

Sumber: Pernyataan HRVD 3058, 9194, 3190, 5305; Communiqué CRRN, tanpa tanggal.

Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh Fretilin/Falintil 1976-1979

336. Komisi mendengar banyak kesaksian berkaitan dengan pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh Fretilin dan Falintil selama periode 1976-1979.^{*} Selama periode ini, pemimpin-pemimpin dan anggota Fretilin dan Falintil terlibat dalam pelanggaran fatal di hampir semua distrik di Timor-Leste, meskipun pemusatan geografis dari pembunuhan-pembunuhan ini berubah dari waktu ke waktu. Para pemimpin senior Fretilin dan para komandan Falintil memerintahkan banyak pembunuhan yang dilaporkan kepada Komisi, dan dalam beberapa kesempatan mereka melakukannya sendiri.

337. Secara umum target-target pembunuhan dapat dibagi dalam beberapa kategori: orang-orang yang termasuk dalam partai politik, terutama UDT dan Apodeti, yang bertikai dengan Fretilin dalam bulan-bulan menjelang invasi besar-besaran dari Indonesia, baik sebagai partisipan dalam konflik internal sebagai pasukan pembantu angkatan bersenjata Indonesia yang memasuki wilayah Timor-Leste; warga masyarakat sipil di wilayah-wilayah yang dikuasai Fretilin yang dicurigai punya hubungan dengan pasukan Indonesia atau ingin menyerah; mereka yang dicurigai atau diketahui sebagai kolaborator; dan mereka yang ketahuan bersalah dalam konflik internal dalam tubuh Resistansi.

338. Pada awal-awal 1976, setelah pembunuhan sebagaimana digambarkan dalam bagian 3.3. di atas (paragraf 172 – 207), yang berlangsung dalam minggu-minggu segera setelah invasi Indonesia, para anggota Fretilin terus membunuh orang-orang yang punya hubungan dengan UDT dan partai politik lainnya. Selama 1976 timbul ketegangan dalam tubuh Resistansi, antara kelompok dominan Fretilin dan kaum nasionalis lain yang menentang strategi dan kepemimpinan Fretilin. Ketegangan itu meledak di pengujung tahun itu menjadi konfrontasi yang berujung pada pembunuhan sejumlah anggota terkemuka kelompok oposisi dan para pendukung mereka. Pada paruh kedua 1977 perbedaan-perbedaan yang berkepanjangan dalam kepemimpinan menyangkut ideologi dan strategi merebakkan sebuah pembersihan internal lagi, dalam mana mereka yang berkaitan dengan Presiden Fretilin sekaligus Presiden Republik Demokratik Timor-Leste, Francisco Xavier do Amaral, menjadi target utama.

339. Walaupun ketiga fase yang luas ini dapat diidentifikasi, sebenarnya fase-fase ini tidak dapat dibedakan secara tegas. Pada 1976, salah satu penyebab perpecahan keretakan antara salah satu penentang utama, Aquiles Freitas Soares, dan pemimpin arus utama Fretilin adalah pertanyaan sejauh mana Resistansi harus bekerjasama dengan anggota-anggota UDT dan partai lainnya. Komisi mendengar kasus di mana orang-orang yang pernah terkait dengan UDT dan partai lain dijadikan sasaran setelah 1976. Perbedaan-perbedaan menyangkut strategi yang mendasari pembersihan pada 1976 dan 1977 sebagian besar serupa dan karena itu tidak

^{*} Pembunuhan oleh Fretilin/Falintil selama periode Desember 1975-Januari 1976 terangkum dalam Seksi 7.2.3.5. di atas.

mengherankan bahwa para *survivor* dari putaran pertama pertikaian pada 1976 sering menjadi sasaran lagi setahun kemudian.

340. Kekerasan dipicu oleh perbedaan. Namun, perbedaan-perbedaan ini sebagian besar menyangkut peranan warga sipil dalam gerakan Resistansi dan sering berakibat merusak atau bahkan fatal terhadap kehidupan warga biasa yang sebelumnya sudah terganggu karena telah menyingkir ke gunung atau hutan bersama Fretilin. Selama tahun-tahun ini, sebagaimana para pemimpin mereka, warga sipil biasa, khususnya mereka yang dicurigai ingin meninggalkan wilayah basis Fretilin untuk kembali ke rumah mereka, juga berisiko disebut “pengkhianat”, yang dapat berakibat pada pembunuhan terhadap diri mereka atau kematian dalam tahanan.

341. Bagian ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil dalam konteks politik. Bagian kedua merangkum informasi yang dikumpulkan oleh Komisi tentang bagaimana warga masyarakat biasa ataupun anggota Fretilin dan Falintil menjadi korban pembunuhan selama periode ini.

Pembunuhan-pembunuhan Fretilin/Falintil: konteks politik

Pembunuhan-pembunuhan oleh Fretilin/Falintil terhadap para anggota UDT dan Apodeti

342. Pada 1976 Fretilin masih mengontrol sebagian besar wilayah Timor-Leste. Komisi mendengar sejumlah pembunuhan dalam periode ini yang dilakukan oleh Fretilin terhadap orang yang berkaitan dengan partai lain. Kebanyakan korban yang diketahui Komisi berkaitan dengan UDT.³⁵² Pembunuhan cenderung terjadi di tempat dukungan terhadap UDT maupun Fretilin sama kuat dan tingkat kekerasan selama perang saudara sangat hebat.

343. Dalam satu kasus yang dituturkan kepada Komisi, pada 4 Maret 1976 sepuluh anggota Fretilin mendatangi rumah seorang anggota UDT bernama Pedro di Desa Matata di Railaco (Ermera) dan menangkapnya. Setelah itu, Fretilin mengikat tangan dan kakinya dengan tali kemudian membawanya ke atas truk *pick up* menuju Mautimate di Desa Matata, tempat mereka membunuhnya.³⁵³ Deponen lain melaporkan pembunuhan dan penghilangan lain yang dilakukan di wilayah Matata oleh Fretilin/Falintil sekitar kurun waktu yang sama.³⁵⁴ Sejumlah deponen melaporkan bahwa selama masa gerakan bersenjata UDT dan reaksi balasan Fretilin selama Agustus-September 1975, baik UDT maupun Fretilin membunuh orang-orang partai lain di Matata.*

344. Kerjasama para anggota UDT dan Apodeti dengan Indonesia, menjelang, selama, dan setelah invasi 7 Desember 1975 menambah dimensi baru dalam pertikaian antara Fretilin dan kedua partai itu.

* Lihat Pernyataan HRVD 1020, 3509, 3510, dan 6203, dan Seksi 7.2.2.4, di atas.

345. Kadang-kadang, para anggota UDT dibunuh oleh anggota biasa Fretilin karena alasan balas dendam. Pada Juli 1976, di Carlilo (Aiteas, Manatuto) empat anggota Fretilin dilaporkan membunuh sepasang suami istri yang sudah tua, Francisco Soares dan Ingracia Soares, yang mendukung UDT.³⁵⁵ Dalam kasus lain ada bukti tentang keterlibatan pejabat tinggi Fretilin.

346. Segera setelah Batalion 330 ABRI melewati Venilale dalam perjalanan ke Viqueque pada akhir Desember 1975, para pemimpin Fretilin di Venilale berinisiatif menangkap, memukuli, dan membunuh anggota UDT dan Apodeti yang mereka curigai bergaul dengan orang Indonesia. Dalam lima kejadian yang berbeda antara 1-12 Februari 1976, para pejabat Fretilin setempat memerintahkan pembunuhan sekurang-kurangnya sembilan orang yang dipercaya sebagai simpatisan UDT.³⁵⁶ Di antara para korban itu adalah enam anggota dari satu keluarga; sepasang suami istri, Claudino Guterres dan Maria Boavida; ketiga anak mereka, José (Azeca), Faustino, dan Crisogno, dan paman Claudino.

347. Pembunuhan-pembunuhan di Venilale menambah panas konflik antara pemimpin Fretilin di Sektor Timur Tengah (Sector Centro Leste) yang saat itu berbasis di Lobito, dan kelompok penentang yang terbentuk di Quelicai pimpinan Aquiles Freitas Soares, Wakil Komandan Regional Falintil Zona Baucau. Maria Boavida adalah adik perempuan salah seorang teman dekat Aquiles, Antonio Freitas. Pada 23 Februari, M231 membawa beberapa anak buahnya ke Uaimori, tempat mereka menembak mati dua orang komandan, Januario Ximenes dan Julio da Silva, yang diyakini M231 bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan di Venilale.³⁵⁷ Tiga hari kemudian, pada 26 Februari, Aquiles Freitas membentuk Komando semi-otonom Boru-Quere dengan M231 sebagai wakil presidennya. (Lihat di bawah, paragraf 354).

348. Orang-orang yang sebelumnya berkaitan dengan UDT juga dicurigai sebagai mata-mata bagi Indonesia. Seorang mantan anggota UDT, Marçal da Costa, ditangkap di Soibada oleh lima orang anggota Fretilin pada 1977 dan dituduh sebagai mata-mata ABRI. Ia dipukuli dan kemudian dibawa ke seorang komandan Falintil, M232, untuk diinterogasi. Setelah lima hari ditahan, Marçal da Costa diikat, digantung, dan ditembak mati oleh seorang anggota Fretilin bernama M233.³⁵⁸

349. Sering kali sasaran pembunuhan-pembunuhan ini dianggap bersalah hanya karena bergaul, dihubungkan dengan UDT atau Apodeti melalui seorang anggota keluarga atau teman yang merupakan anggota partai itu, dan bukannya menjadi anggota salah satu partai itu sendiri. Sebagaimana halnya selama konflik dalam tubuh gerakan Resistansi pada 1976, penyerangan Fretilin terhadap orang-orang yang berkaitan dengan UDT dan Apodeti sekali lagi menghidupkan dan melanggengkan ketegangan dalam tubuh Resistansi selama 1977.

350. Pada 8 Mei 1977 Maria Antonia, seorang pengurus (*delegada*) OPMT, ditahan di Haturui, Lacló, karena dicurigai punya hubungan dengan ABRI dan ia dibawa ke kantor Subkomite Mahadik di Aldeia Fitun. Di sana ia melihat paman-pamannya, Alexandre, Maharek, Masanak, Makai, dan Miguel, dan anggota keluarganya yang

lain, serta sepupunya, Maria Fatima dan Paulino, yang menunjukkan tanda-tanda telah disiksa. Mereka semua diinterogasi, dipukuli, dan disiksa dengan besi panas sebelum diikat ke pohon. Semua anggota keluarga dituduh sebagai pengkhianat. Maria Fatima dan Maria Antonia dituduh telah berhubungan dengan ayah Maria Antonia, Antonio Gregorio, seorang *delegado* UDT. Mereka kemudian dibawa ke penjara Fretilin di Welihumetan (Hatuconan, Lacro).

351. Setelah beberapa hari mereka dibawa ke Roluli, masih di Lacro, tempat mereka ditahan selama semalam dan diinterogasi oleh, antara lain, Wakil Presiden Fretilin M234. Maria Antonia mengakui bahwa ia memang mengadakan kontak dengan ayahnya. Para tahanan ini lalu dibawa ke pusat penahanan Fretilin (Renal, *Rehabilitação Nacional*), di Aikurus, Remexio. Selama mereka ditahan di Renal, 12 orang anggota keluarga ini meninggal akibat dari penganiayaan atau dibunuh.[†]

352. Penargetan terhadap para mantan anggota UDT dan Apodeti dilaporkan terus terjadi sampai 1978. Misalnya pada tahun itu Matias Amari Pinto dan Pastor João Martins ditangkap oleh Fretilin di Zona Bautae, di Uatolari (Viqueque). Matias Amari Pinto mengatakan kepada Komisi bahwa mereka ditahan di kandang babi bersama-sama sejumlah tahanan Apodeti dan UDT, dan ditahan di sana selama tujuh bulan. Pada saat yang berbeda dalam periode itu, seorang anggota Apodeti, Albeto Maupelo, dan seorang anggota UDT, João Brito, mencoba melarikan diri; namun keduanya ditangkap kembali dan ditembak mati.³⁵⁹

Pembunuhan-pembunuhan sebagai akibat dari konflik internal Fretilin 1976

353. Konflik dalam tubuh Resistansi muncul ke permukaan segera setelah invasi dan terus berlangsung selama periode ini dan berakhir dengan kehancuran *bases de apoio*. Pada inti pertikaian yang sangat mematikan para pimpinan utama Fretilin percaya bahwa “politik memimpin senjata”. Salah satu implikasi dari doktrin ini adalah bahwa Fretilin secara serentak melancarkan perang sekaligus melaksanakan revolusi, dan pencapaian kedua tujuan pada saat yang bersamaan menuntut penguasaan atas basis populasi yang besar. Pada saat yang sama perbedaan ideologi yang lain—tentang sejauh mana gerakan Resistansi harus dikontrol secara terpusat, tentang sejauh mana Marxisme sesuai dengan budaya dan agama orang Timor, tentang peranan para pemimpin tradisional dan tentang seberapa inklusif seharusnya gerakan nasionalis—juga menambah panasnya konflik. Dari kesaksian yang diterima dari berbagai sumber juga terbukti bagi Komisi bahwa walaupun

.....
* Untuk informasi selanjutnya tentang Renal, lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan, khususnya bagian tentang Renal.

† Mereka yang dibunuh atau meninggal di dalam penahanan adalah Maria Fatima (sepupu Maria Antonia), Paulino (sepupu yang lain), Libadasi (neneknya), Maharek (paman), Masanak (paman), Makai (paman), Miguel (paman), Alexandre (paman), Biliba (bibi), Paulina (bibi), Maria Sibak (bibi) dan Bikristi (bibi) (Pernyataan HRVD 6498 dan 7990; dan CAVR, Wawancara dengan Maria Antonia, Lacro (Manatuto), 20 Maret 2003.

perselisihan-perselisihan ini diungkapkan secara ideologis, sering kali perselisihan itu lebih karena alasan personal, baik karena antagonisme dan ambisi pribadi, atau perbedaan latar belakang, generasi, dan perspektif. Jalannya perang itu sendiri juga memperburuk perbedaan-perbedaan pokok dalam tubuh gerakan Resistansi; kemunduran militer yang diderita oleh pihak Resistansi dan penderitaan yang terus memburuk dari populasi di hutan mengeraskan posisi kedua belah pihak dan memperuncing ketidaksepakatan.

354. Saat keretakan mulai terjadi di antara Cascol (Comissariado do Sector Centro Leste, Komisariat Sektor Timur Bagian Tengah) di Lobito dan Sersan Aquiles Freitas Soares beserta para pengikutnya selama Februari 1976, Sersan Aquiles membentuk komando semi-otonom yang disebut Comando da Luta Boru-Quere, di Uaibitae pada lereng Gunung Matebian. Aquiles sendiri menjadi presiden Comando da Luta Boru-Quere dengan M231 sebagai wakilnya. Wibawa Aquiles Freitas Soares berasal dari statusnya sebagai ahli waris Kepangeranan Letemumu di Quelicai dan 12 tahun masa tugasnya dalam ketentaraan Portugis, yang terakhir ia bertugas dalam Kompi Kavaleri Keenam di Atabae tempat ia memperoleh kenaikan kedudukan setelah perginya Portugis, melalui peran heroiknya dalam melawan serbuan Indonesia ke Bobonaro pada Oktober-November 1975.³⁶⁰

355. Saat Atabae jatuh ke tangan Indonesia pada 26 November, Aquiles Freitas Soares, para pengikutnya dan 64 anak dari Quelicai, yang sebelumnya dikirim ke Atabae untuk dididik di bawah arahan Aquiles, memulai perjalanan panjang ke timur melalui Dili dan Aileu, yang berakhir di Quelicai pada awal Januari 1976. Kelompok ini dipersenjatai dengan baik; senjata-senjata dan amunisi dibawa oleh Aquiles dari Atabae ditambah dengan senjata-senjata yang disita oleh sekutunya, Sersan Ponciano dos Santos, yang memimpin penggerebekan gudang senjata di Quartel Geral (Markas Besar) Portugis di Taibessi saat reaksi bersenjata Fretilin, di mana ia tidak menyerahkan semua senjata itu kepada ke angkatan bersenjata Fretilin.

356. Ponciano dos Santos ditunjuk sebagai kepala Komite Komando Keamanan. Dua orang bersaudara dan mantan pemimpin UDT, João Teodosio de Lima dan Augusto Pires, ditugaskan bertanggung jawab sebagai Komite Politik dan Administratif. Dua orang imam, Pastor Eligio Locatelli dan Pastor Luis da Costa, disebut sebagai penasihat.³⁶¹

357. Pada Mei 1976 Comando da Luta Boru-Quere dan para perwakilan Fretilin mengadakan pertemuan selama tiga hari di sebuah gedung sekolah di Quelicai mencoba menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Komisaris Politik untuk Sektor Timur Bagian Tengah, Vicente Reis (Sa'he), memimpin delegasi Fretilin. Pada pertemuan itu Aquiles Freitas Soares mengusulkan agar ia diangkat menjadi Komandan Region II (Baucau), menolak permintaan Fretilin agar senjata-senjata yang ia punyai dibagi dengan satuan-satuan Falintil yang lain, dan meminta agar orang-orang dari Venilale yang mengungsi di Uaibitae setelah kekerasan di Februari diperbolehkan kembali ke rumah mereka. Orientasi Marxis-Leninis Fretilin juga dibicarakan.³⁶²

358. Pendirian Aquiles Freitas Soares meyakinkan para anggota Komite Sentral Fretilin: penolakan penyerahan sebagian dari persediaan senjatanya yang besar meyakinkan sejumlah anggota Komite Sentral bahwa ia merencanakan kudeta. Desas-desus mulai menyebar bahwa Aquiles berencana membunuh Vicente Reis.³⁶³

359. Situasi ini menjadi gawat pada 28 Oktober 1976, saat setelah terjadi kontak senjata antara kedua pihak, sebuah pertemuan dilangsungkan lagi di Uaibitae. Sebelum pertemuan itu kelompok Boru-Quere telah diyakinkan untuk melucuti senjata mereka. Kelompok Lobito kemudian menangkap Aquiles dan para pemimpin kelompok Boru-Quere yang lainnya, bersama beberapa pengikut mereka dan mereka yang dicurigai sebagai sekutu, termasuk dua orang *liurai* dari Distrik Viqueque, Fernando da Sousa dari Uato Carbau dan Adelino de Carvalho dari Uatolari.³⁶⁴ Beberapa di antara mereka, termasuk Antonio Freitas dan August Pires, dibawa ke Baguia; yang lainnya, termasuk Aquiles Freitas Soares, Ponciano dos Santos, dan João Teodosio de Lima, dibawa ke Ulusu, Uatulari (Viqueque), lalu ke Lobito, tempat mereka diserahkan kepada para anggota Komite Sentral Fretilin.³⁶⁴ Anggota Komite Sentral Fretilin rupanya terbagi dalam menyikapi bagaimana cara menangani Aquiles; satu faksi menginginkan Aquiles dieksekusi, sedangkan yang lain menyarankan pemberian semacam rehabilitasi.³⁶⁵ Pada suatu hari di Desember anggota Komite Sentral memutuskan mengeksekusi Aquiles dan pendukung utamanya.³⁶⁶ Aquiles sendiri, Ponciano dos Santos, dan João Teodosio de Lima dieksekusi di Lobito, sementara Antonio Freitas dieksekusi di Baguia pada Desember 1976 atau Januari 1977.³⁶⁷ Yang lainnya, termasuk Fernando da Sousa dan Adelino de Carvalho, dikirim untuk program pendidikan politik.

360. Berbagai sumber melaporkan bahwa Aquiles Freitas Soares dihukum karena oposisinya terhadap ideologi Fretilin; ia telah mengkhianati gerakan Resistansi dengan bekerjasama secara aktif dengan kekuatan pendudukan Indonesia.³⁶⁸ Komisi tidak menemukan bukti apa pun bahwa tuduhan ini berdasar.

361. Kesaksian yang diterima Komisi menyangkutkan Vicente Reis, komandan Sektor Timur Bagian Tengah; Maubrani (Cirilo Nunes), komandan Region Baucau; Kilik Wae Gae (Reinaldo Correia), komandan Zona Bautae; João Meneses (Darloi); dan komandan Forca de Intervenção (Pasukan Intervensi), José Lemorai, dalam penangkapan terhadap kelompok Boru-Quero pada 28 Oktober 1976. Menurut kesaksian lain yang diterima Komisi dari Valente de Sousa Guterres, yang ditahan bersama Antonio Freitas di Baguia, mereka yang dibawa ke Baguia diinterogasi oleh M278 dan M279. Pemimpin eksekusi adalah M280.³⁶⁹ Komisi belum dapat menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap eksekusi Aquiles Freitas Soares, Ponciano dos Santos, dan João Teodosio de Lima di Lobito.

362. Sementara kasus ini belum selesai di Quelicai, sebuah kasus serupa dan terkait muncul di Subdistrik Iliomar di Lautém. Konflik ini memperhadapkan lagi seorang

.....
* Menurut Marito Reis, 36 orang dari kelompok Lobito ditangkap di Uaibitae (Wawancara CAVR dengan Marito Reis, Baucau, 23 September 2003). Sebuah dokumen yang dimiliki CAVR menyebutkan nama 34 orang yang ditangkap, enam di antaranya dibunuh, tetapi ada indikasi bahwa daftar nama ini tidak lengkap (Dokumen: Quelicai Uaibitae, 28 Oktober 1976, submisi kepada CAVR oleh Anthony Goldstone).

pemimpin tradisional, Francisco Ruas Hornay, yang juga berdinis di ketentaraan Portugis, dengan para pemimpin lokal dan sektoral Fretilin dan Falintil, dan menyebabkan keretakan yang dalam di antara desa-desa di Subdistrik Iliomar.

363. Sebagaimana halnya Aquiles, Francisco Ruas Hornay telah menunjukkan komitmen pada alasan nasionalis dengan melawan serbuan Indonesia ke Bobonaro pada September–November 1975. Ia telah mempertahankan Balibó terhadap serangan Indonesia, dan setelah jatuhnya Balibó pada pertengahan Oktober, ia bergabung dengan Aquiles Freitas Soares di Atabae. Setelah invasi besar-besaran ia juga kembali ke basis asalnya di Iliomar di mana tak lama kemudian ia terlibat dalam konflik dengan Komite Zona Fretilin dan komandan Falintil setempat. Ia menolak kebijakan Fretilin mengumpulkan penduduk Iliomar di kamp-kamp (*acampamentos*), baik karena alasan militer maupun ideologis. Pada Juni 1976 komisaris politik Sektor Ponta Leste, Sera Key (Juvenal Inacio), dan *adjunto* Fernando Txay memerintahkan Francisco Hornay untuk melakukan kritisisme terhadap diri sendiri dan mengirinkan Hornay dan pengikut-pengikut dekatnya ke Renal di Belta Tres dekat Lospalos selama 14 hari untuk *correctivo*.

364. Namun, setelah Francisco Ruas Hornay dan para pengikutnya kembali dari Belta Tres ke Iliomar, konflik muncul lagi. Beberapa orang pengikutnya ditangkap dalam pertemuan yang diadakan oleh Komite Sentral pada awal Oktober 1976. Dan, percaya bahwa ia sendiri akan ditangkap, Francisco Hornay pergi mengunjungi Aquiles di Uaibitae. Aquiles menyetujui permintaan senjata dari Francisco Hornay. Saat situasi memburuk, Francisco Hornay dan para pengikutnya menyingkir Gunung Paitah. Sera Key dan Fernando Txay mengarahkan penduduk Iliomar untuk mengepung para pengikut Francisco Hornay di Gunung Paitah. Sebagai akibat dari operasi ini, kebanyakan dari mereka yang telah menyingkir ke pegunungan menyerah dan kembali ke desa mereka, tetapi Francisco Hornay dan puluhan pengikutnya melarikan diri ke Kuladera di Uato Carbau.

365. Dua minggu kemudian pada pertengahan November 1976 Fretilin/Falintil sekali lagi mengarahkan penduduk Iliomar, kali ini untuk menangkap Francisco Ruas Hornay dan para pengikutnya di Uato Carbau. Pada 13 November pembunuhan pertama berlangsung. Dalam perjalanan ke Uato Carbau, di tempat bernama Irafok di *aldeia* Larimi (Cainliu, Iliomar), pasukan Fretilin menangkap Paul Hornay dan memarangnya sampai mati.³⁷⁰ Tak lama sesudah itu, pasukan Fretilin memasuki Uato Carbau dan menangkap Francisco Hornay dan para pengikutnya. Pada 17 November delapan orang di antara mereka—Antonio Oliveira, Oscar Ferreira, Angelo Pinto, Antonio Soares, Silvino Ximenes, Libertino Barros, Bernardo Soares dan Juli Ximenes—dilaporkan dibawa ke Lore di Subdistrik Lospalos dan dibunuh.³⁷¹ Pada 24 November 1976 Francisco Hornay dan lima orang lainnya—Duarte Ximenes Pinto, José Nunes, Dinis de Castro, Marcos Pintos, dan Manuel Sarmento—dilaporkan dibawa ke tempat bernama Muapetiti untuk dibunuh. Semuanya, kecuali Manuel Sarmento, dilaporkan dibunuh di tempat itu. Manuel Sarmento berhasil meloloskan diri tetapi ditemukan dan dibunuh seminggu kemudian.³⁷²

366. Pada Oktober 1976, pada bulan yang sama saat konfrontasi dengan Aquiles Freitas dan Francisco Ruas Hornay dan para pengikut mereka mencapai puncaknya di Sektor Perbatasan Bagian Utara (Sector Fronteira Norte), sebuah pertikaian dalam tubuh gerakan Resistansi, yang tampaknya tidak berhubungan dengan kasus di atas, juga berakhir dengan kekerasan fatal, termasuk di dalamnya pembunuhan-pembunuhan. Pada 5 Oktober Wakil Kepala Staf Falintil, José da Silva, dan sekitar 40 pengikutnya, termasuk para perempuan yang termasuk dalam OMPT, meninggalkan basis mereka di Fatubessi (Hatolia, Ermera) ke Neorema (Asulai/Sare, Hatolia, Ermera), markas gabungan komando militer sektor dan komisariat politik. Maksud José da Silva bermaksud menggugat penurunan pangkatnya sebagai Wakil Kepala Staf Falintil.

367. Sumber-sumber yang diwawancarai oleh Komisi tak sepakat tentang apa yang ingin dilakukan oleh José da Silva saat ia tiba di Neorema; apakah ia ingin membicarakan penurunan pangkatnya dan beraksi melawan para pemimpin jika mereka menolak, atau apakah ia pergi ke sana dengan maksud melakukan kekerasan.³⁷³ Apa pun maksudnya, segera setelah tiba di Neorema terjadi konfrontasi hebat yang menimbulkan korban jiwa dan kelompok Fatubessi menangkap seluruh pemimpin sektor termasuk Komisararis Politik, Helio Pina (Mau Kruma); Komandan Sector, Martinho da Silva; dan wakilnya, Sebastião Sarmento.

368. Pada 6 Oktober sebuah kelompok yang loyal kepada Komando Neorema dari Poerema di Subdistrik Ermera, yang dipimpin oleh Pedro Lemos, melakukan serangan balasan.³⁷³ Mereka berhasil membebaskan para pemimpin yang ditahan dan menangkap banyak anggota pasukan Fatubessi. José da Silva dan beberapa orang lain berhasil melarikan diri ke Ponilala (Ermera, Ermera), tetapi ditangkap di sana oleh pasukan setempat yang loyal kepada Komando Sektor, dan dibawa kembali ke Neorema. Tiga dari mereka yang ditangkap dilaporkan dibunuh di Neorema pada 8 Oktober.³⁷⁴

369. Selama tahun-tahun berikutnya para tahanan yang masih hidup, termasuk beberapa perempuan OMPT, terus-menerus dipindahkan dari satu tempat penahanan ke tempat penahanan lainnya, beberapa di antaranya dibebaskan, beberapa orang meninggal dalam penahanan, dan beberapa orang dibunuh. Komisi mendengar bahwa sekitar 40 di antara mereka meninggal karena privasi dan penganiayaan atau dibunuh.³⁷⁵ José da Silva dilaporkan ditembak pada 15 Agustus 1977 di Fatubessi, konon oleh para pengawal Helio Pina, M235 dan M236.³⁷⁶ Setidak-tidaknya satu orang, Mateus Alves, dibunuh di Fatubessi sekitar kurun waktu yang sama.³⁷⁷ José da Silva dituduh berencana menyerah kepada ABRI dan mendorong yang lainnya melakukan hal yang sama, meskipun para pengikutnya yang masih hidup menyatakan kepada Komisi bahwa José da Silva tidak melakukan itu.³⁷⁸

* Untuk kemungkinan yang berbeda ini, lihat wawancara CAVR dengan Celestino de Carvalho Alves dan pernyataan HRVD 8385.

Pembunuhan akibat konflik internal Fretilin 1977

370. Pada 19 September 1977 Komite Sentral Fretilin mengeluarkan *communiqué* yang mengumumkan penangkapan Francisco Xavier do Amaral sepuluh hari sebelumnya dan pengadilan terhadapnya yang akan datang. Menyebut Francisco Xavier do Amaral “pengkhianat paling busuk yang pernah ada dalam sejarah kita”, *communiqué* ini menceritakan kembali serangkaian pelanggaran berat yang dituduh dilakukan oleh Amaral dan para pengikutnya, termasuk berencana membersihkan kepemimpinan Komite Sentral dan sejumlah penyimpangan dari ideologi Fretilin, yang mencakup percobaan “memisahkan tugas-tugas sipil dari militer”. *Communiqué* itu mengumumkan bahwa Presiden Fretilin telah melakukan kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi dan dikeluarkan dari partai.³⁷⁹

371. *Communiqué* 19 September itu menuduh bahwa dukungan terhadap Francisco Xavier do Amaral terpusat di kampung halamannya di Turiscaí dan Fahinehan di Manufahi; Remexio dan Lequidoe di Aileu; Laçlo, Ilimano, dan Laclubar di Manatuto; dan Maubisse di Ainaro.³⁸⁰ Kampanye melawan para pendukung Amaral juga terpusat di daerah-daerah ini, meskipun kemudian meluas ke timur ke Quelicai di Distrik Baucau dan Uato Carbau dan Uatolari di Distrik Viqueque, dan mencapai ke wilayah-wilayah seperti Alas (Manufahi), di mana Amaral dituduh mencoba membangun pengaruhnya.³⁸¹ Dalam semua daerah ini, mereka yang dicurigai sebagai pendukung Amaral ditangkap, dan banyak dari mereka selanjutnya dibunuh atau meninggal dalam tahanan.

372. *Communiqué* itu juga menyebut sejumlah “pengkhianat” yang dikatakan telah bertindak sebagai “bidak-bidak” Amaral. Mereka ini termasuk dua anggota Komite Sentral dan beberapa orang kader menengah (*quadros medios*). Hampir semua yang disebut juga dibunuh atau meninggal selama atau segera setelah masa penahanan.^{*}

373. Timbul skeptisisme di antara para tentara profesional yang bergabung dengan gerakan Resistansi tentang kebijakan menahan populasi warga sipil yang besar dan pada saat yang sama mencoba agar perjuangan militer diperkuat selama 1977, saat situasi militer dan kondisi kehidupan penduduk sipil bertambah buruk dan semakin jelas bahwa gerakan Resistansi tidak dapat bergantung pada bantuan luar untuk memenangi perang. Dari perspektif mereka yang berbeda, para tentara profesional dan Francisco Xavier do Amaral sepakat tentang persoalan ini.[†] Beberapa komandan senior diganti sebagai bagian dari pembersihan terhadap

* Nama anggota Komite Sentral adalah Mário Bonifacio do Rego, Sekretaris Komite Regional Manatuto, dan Diogo Monis da Silva, komandan wilayah Laclubar. “Kader-kader tingkat menengah”, baik sipil dan militer, yang nama-namanya disebutkan antara lain: José Vicente, Sekretaris Zona Laçlo; Wakil Sekretaris Zona Laçlo, Antonio Heu; Sekretaris Zona Laclubar, Afonso do Rego; Sekretaris Zona Remexio, Ananias da Silva, dan Wakil Sekretaris Zona Remexio, Tobias Mendonça (“A Nossa Vitoria”, h. 10). Dilaporkan kepada Komisi bahwa setidaknya ketujuh orang ini dibunuh atau meninggal akibat dari penganiayaan dalam tahanan.

† Dalam wawancara dengan Komisi, Xanana Gusmão menyatakan bahwa pemikiran Francisco Xavier do Amaral tentang persoalan ini adalah akibat tekanan dari para komandan militer (Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004). Francisco Xavier do Amaral sendiri mengklaim bahwa ia sampai pada kesimpulan bahwa penduduk sipil harus diperbolehkan untuk menyerah secara bebas (Francisco

para pendukung Amaral yang dimulai pada Agustus 1977. Dua komandan sektor, Martinho Soares dari Sektor Perbatasan Utara (Sector Fronteria Norte) dan Agostinho Espirito Santo dari Sektor Perbatasan Selatan (Sector Fronteira Sul), yang beberapa kali bersitegang dengan Komisaris Politik sektor mereka, menjadi korban perbedaan tajam ini. Martinho Soares dimasukkan ke penjara pada atau sekitar Oktober 1977 dan ditahan oleh Fretilin di Abat (Fatubessi, Ermera) karena dituduh berencana menyerah kepada Indonesia. Salah seorang saksi mengatakan kepada Komisi bahwa saat terakhir ia melihat Martinho Soares masih hidup saat ia disiksa, di mana setengah bagian tubuhnya dikuburkan di tanah sedangkan bagian atas tubuhnya dibakar dengan plastik yang meleleh. Kemungkinan besar setelah itu ia dibunuh.³⁸²

374. Keputusan untuk menyingkirkan Agostinho Espirito Santo sebagai komandan Sektor Perbatasan Selatan diambil pada pertemuan Komite Sentral Fretilin di Herluli (Remexio, Aileu) pada akhir Juli 1977. Pertemuan itu juga memutuskan memecat Francisco do Amaral.* Komite diberitahu bahwa Agostinho Espirito Santo ditahan bersama sekitar 85 orang pengikutnya segera setelah itu atas perintah Komisaris Politik Sektor Perbatasan Selatan, César Mau Laka, dan dibawa ke Zulo (Lepo, Mape/Zumalai, Covalima).³⁸³ Ketegangan muncul di antara mereka berdua menyangkut kebijakan Fretilin terhadap warga sipil. Agostinho Espirito Santo dan wakilnya, João Baptista Soares de Jesus (Bere Loco Meo), setuju membiarkan pendudukan sipil menyerah, baik untuk meringankan penderitaan mereka maupun memberikan pasukan Resistansi kebebasan yang lebih besar dalam bertindak.³⁸⁴ João Baptista, tentara reguler dalam ketenteraan Portugis yang telah memerangi perang gerilya di Guinea-Bissau, Mozambik, dan Angola, dipandang sebagai pendukung militer utama pandangan ini, meskipun ia tidak tersentuh pembersihan itu.³⁸⁵ Agostinho Espirito Santo dibawa ke Fahinehan (Fatuberliu, Manufahi), tempat ia dan empat orang lain (Juvenal Belo, Alexandre, Paul, dan Ramerio) dilaporkan dibunuh atas perintah dua anggota Komite Sentral, M170 dan M171, pada sebuah tempat di Mirik Lout di Desa Fahinehan.³⁸⁶ Para Komandan Falintil yang lain dan para pasukan mereka ditangkap dan dibunuh atau meninggal karena penganiayaan dalam tahanan selama kampanye anti-Amaral.

375. Penangkapan para simpatisan Amaral dimulai pada Agustus segera setelah Komite Sentral mengadakan pertemuan di Herluli. Di Herluli sendiri, sejak akhir Agustus, beberapa ratus tahanan dari Remexio, Laclo, Laclubar, Turisca, dan Maubisse ditahan dalam penjara yang dibangun tergesa-gesa, yang terdiri atas sebuah lubang besar ditutupi balok.³⁸⁷

Xavier do Amaral, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, Dili, 15-18 Desember 2003).

* Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004; dan Antonio Amado de Jesus Ramos Guterres, Laclo, 6 November 2003. Tidak jelas apakah keputusan untuk menyingkirkan Martinho Soares diambil dalam pertemuan ini, meskipun salah seorang yang hadir dalam pertemuan ini mengatakan kepada Komisi bahwa Komite Sentral dalam pertemuan ini memutuskan memecat beberapa komandan (Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004).

376. Francisco Xavier do Amaral sendiri ditangkap oleh Menteri Keamanan Publik dan Informasi RDTL, M172, pada akhir pertemuan Komite Sentral Fretilin di Tutuloro (Turiscaí, Manufahi) pada 9 September 1977. Istri dan anak-anaknya, kerabat-kerabat dekatnya, dan para pengawalnya ditahan pada waktu yang sama.³⁸⁸

377. Francisco Xavier do Amaral menceritakan kepada Komisi bahwa sebulan setelah penangkapannya, ia dan para tahanan dibawa dalam perjalanan kaki yang panjang melalui desa-desa Soibada, Fatumakerek, Laclubar di Manatuto dan kembali ke Turiscaí sebelum dibawa ke Renal di Aikurus. Sepanjang perjalanan itu, mereka yang menggiringnya menangkap lebih banyak orang lagi sehingga saat mereka mencapai Aikurus jumlah tahanan dalam kelompok itu telah mencapai sekitar 50. Setiap hari empat sampai lima orang meninggal, dan para tahanan yang tidak bisa berjalan akan dibunuh.³⁸⁹

378. Amaral menderita penyiksaan hebat dan deprivasi (lihat Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan dan penganiayaan di Renal), tetapi selamat. Beberapa orang yang dekat dengannya, termasuk para pengawalnya, dibunuh dan dua anaknya dilaporkan meninggal dalam tahanan karena kelaparan.³⁹⁰

379. Namun, pencarian “para pengkhianat” dalam Fretilin dan pembunuhan mereka secara terbuka belum dimulai pada 20 Agustus 1977. Perpecahan dalam Komite Sentral yang mulai nyata sejak Konferensi Soibada pada Maret-April 1976 telah bertambah parah pada saat Konferensi Laline pada Mei-Juni 1977, yang diboikot oleh Francisco Xavier do Amaral (lihat Bagian 5: Resistansi: Struktur dan strategi).

380. Tuduhan menjadi pengkhianat telah menjadi umum pada saat ini, terutama di Sektor Utara Bagian Tengah. Beberapa bulan sebelum pembersihan para pendukung Amaral yang dimulai pada Agustus, beberapa pembunuhan dilaporkan terjadi pada Maret-Juni di Renal Nundamar (Remexio, Aileu). Pada Maret, sebanyak 26 orang dilaporkan ditangkap di *aldeia* Fitun di Lacló (Manatuto) dan dibawa ke markas Fretilin Lima Leu di Remexio (Aileu). Mereka dituduh menjadi pengkhianat yang berhubungan dengan para mantan anggota UDT, termasuk Francisco Lopes da Cruz dan Cancio Noronha, yang pada saat itu bekerja dalam pemerintahan Indonesia. Tiga orang tahanan—João Adolfo Conceição Cabral de Deus, Manuel Rodrigues Pereira, dan Mau-Huli—dilaporkan meninggal karena penyiksaan di markas Lima Leu. Pada April kelompok ini dipindahkan ke Renal di Remexio, tempat 21 orang di antara mereka dilaporkan dibunuh. Selama Juli ada sejumlah penangkapan selanjutnya di Lacló. Tiga dari mereka yang ditangkap pada saat ini—Filomeno Faria Lobato, Bernadino Carceres, dan Jacinto Correia—juga dilaporkan dibunuh.³⁹¹

381. Beberapa sumber juga mengatakan kepada Komisi tentang pembunuhan dua orang, Maria Fatima dan Zacarias, selama periode ini.

382. Keduanya ditangkap di Berahu, Aldeia 8 de Março (Liurai) pada Maret 1977, rupanya karena mencoba melarikan diri dari sebuah markas Fretilin di Dali. Mereka dituduh menjadi mata-mata dan dibawa ke Renal Nundamar. Warga yang tinggal di sekitar tempat itu diberitahu bahwa akan diadakan sebuah pesta. Selama pesta itu para pemimpin Fretilin meminta sukarelawan untuk membunuh Maria Fatima

dan Zacarias. Tidak seorang pun maju, sehingga seorang komandan Peleton Falintil M173 menembak keduanya. Maria meninggal seketika, tetapi Zacarias tidak sehingga dibunuh oleh *adjunto* M176. Tak lama setelah pembunuhan Maria Fatima, adik lakilakinya, Luis Pereira, yang sebelumnya ditangkap bersama dengannya, dilaporkan meninggal di Renal karena diliputi dukacita atas kematian saudara perempuannya.³⁹² Kira-kira dalam waktu yang sama seorang yang lain dari Liurai, João Freitas, ditangkap dan ditahan dalam penjara bawahanah, Renal Nundamar, atas perintah *adjunto* M176. Pada 20 Mei ia dibawa keluar Renal dan ditikam mati oleh dua orang tentara Falintil, M176 dan M175.³⁹³

383. Menurut informasi yang diterima Komisi, pembunuhan massal pertama di Herluli sendiri dilakukan di depan umum pada 20 Agustus 1977, ulang tahun kedua berdirinya Falintil. Beberapa saksi menggambarkan pembunuhan massal ini kepada Komisi.³⁹⁴

384. Antonio Amado JR Guterres menggambarkan sebagai berikut:

Saya masih ingat dengan persis apa yang terjadi pada tengah malam, pada 19 Agustus 1977 dalam pertemuan para pemimpin Fretilin, M234 mengumumkan kepada publik bahwa Francisco Xavier do Amaral adalah pengkhianat. Pada saat itu Xavier belum ditahan oleh Fretilin...[P]ada tanggal 20 Agustus 1977 tepat pukul 12 siang Fretilin membunuh tujuh orang sekaligus dalam satu lubang. Di antara ketujuh orang itu, saya hanya mengenal Paulina Soares. Kami sama-sama menjadi guru pada zaman Portugis. Lokasi pembantaian itu adalah di Herluli...Hari [pembunuhan] itu bertepatan dengan ulang tahun Falintil, 20 Agustus. Pada saat upacara bendera telah ada perintah untuk menyiapkan lubang. Setelah upacara bendera, ketujuh orang itu dimasukkan ke dalam lubang dan semua orang diminta datang untuk menyaksikan jalannya pembunuhan itu. Saat ketujuh orang itu sudah berada dalam lubang, M178 berkata kepada mereka, "Waktu kalian sudah habis, sekarang kalian harus mempersiapkan diri." Sebelum pembantaian, Paulina Soares berkata "Kamerad sekalian, saya akan mati dan tidak punya apa-apa. Saya hanya mempunyai sehelai pakaian untuk disampaikan kepada ibuku yang tinggal bersama kalian untuk memperjuangkan kemerdekaan." Setelah Paulina menyampaikan pesan itu, ia segera menanggalkan pakaian dan memberikannya kepada seseorang. Mereka kemudian memuntahkan peluru. Aku melihat semua orang telah tewas kecuali seorang yang bertubuh besar. Orang itu mengatakan, "Aku akan segera meninggal, tapi kalian tidak akan menang." Setelah itu M178 langsung mencabut bayonet dan memotong tubuh orang itu sehingga kehilangan banyak darah. Melihat begitu banyak darah dari tubuh orang itu, saya langsung pingsan. Saya tidak ingat berapa lama saya tak sadarkan diri, sehingga saya tidak tahu saat ketujuh orang itu dikuburkan."³⁹⁵

385. Seorang saksi lain mengatakan bahwa beberapa pengawal Francisco Xavier do Amaral termasuk yang dieksekusi pada 20 Agustus.*

386. Domingos Maria Alves (Ambulan) menggambarkan kepada Komisi tentang pembunuhan sepuluh orang, yang menurutnya dibunuh atas perintah Menteri Keamanan Publik dan Informasi Fretilin M172:

Keesokan harinya, mereka memerintahkan enam orang milisi menggali lubang untuk menguburkan tahanan yang akan dibunuh. Siang harinya mereka mulai membariskan 20 orang dan memanggil 10 orang yang akan dibunuh di tepi sungai dekat kantor...Kemudian, orang-orang disuruh keluar untuk menyaksikan.

M172 menyuruh mereka berdoa. Setelah selesai berdoa, kami menunjukkan tempat kepada mereka. Mata mereka ditutup dan Adjuntu M238 yang menembak. Dua orang membawa seorang lagi, M177 memerintahkan menutup matanya, lalu M238 menembaknya. Begitulah seterusnya sampai kesepuluh orang itu dibunuh. Di antara kesepuluh orang itu ada seorang perempuan bernama Albertina. Saat ia diseret, ia mencaci-maki para pembesar di sana:

“Kalian para pembesar menjalankan politik yang tidak benar, mendirikan partai yang tidak beres, hanya membuat kami meninggalkan keluarga dan harga benda kami. Kita tinggal bersama. Makan dan minum bersama, tetapi saling membunuh seperti binatang. [Orang] yang tidak bersalah, dikatakan bersalah. Mengkhianati apa? Orang melakukan negosiasi juga dikatakan pengkhianat...”

M172 dan teman-temannya menjawab: “Kami memberikan tempat yang paling baik untuk kalian”. Lalu kemudian mereka memerintahkan Agustina berdiri di atas mayat-mayat teman-temannya, namun ia menolak. Lalu mereka melemparkannya ke atas mayat-mayat itu, namun ia turun lagi. Ia terus memaki mereka. Mereka memaksanya menutup matanya, namun ia menolak. Disuruh memberikan pesan terakhir, ia juga menolak. Albertina pun tidak bersedia ketika disuruh berdoa. Akhirnya M238 menembaknya tiga kali, namun ia tidak [segera] mati. Ia tetap berdiri dan berbicara sehingga mereka menguburkannya hidup-hidup.³⁹⁶

.....
* Wawancara CAVR dengan Maria Antonia, Lacló, Manatuto, 20 Maret 2003. Beberapa sumber melaporkan pembunuhan salah seorang pengawal Francisco Xavier do Amaral, bernama Rafael, tetapi pembunuhan itu tampaknya terjadi setelah Amaral dibawa ke Beutlala, Remexio, pada September 1977 (Pernyataan, HRVD 8010).

387. Beberapa pembunuhan massal terjadi lagi di Herluli. Menurut Domingos Maria Alves (Ambulan), pembunuhan di depan publik menjadi peristiwa minggu selama periode ini.* Komisi menerima beberapa pernyataan yang menegakkan pembunuhan di depan umum atas sekelompok orang yang berjumlah antara enam sampai sepuluh orang yang ditangkap di Faturasa (Remexio, Aileu) dan dibunuh di sekitar Renal.† Setidaknya beberapa anggota kelompok ini, José Mendonça, Alarico, Manuel da Silva, Zacarias Mendonça, dan Francelino Mendonça, dilaporkan ditangkap setelah menulis surat yang menyerukan pemecatan Alarico Fernandes.³⁹⁷ Wakil Presiden Fretilin, M234, yang hadir dalam eksekusi itu, kemudian dilaporkan mengatakan kepada mereka yang menyaksikan eksekusi bahwa mereka juga akan menghadapi nasib yang sama jika mereka mengikuti contoh orang-orang yang baru saja dibunuh.³⁹⁸

388. Menurut sejumlah pernyataan dan wawancara yang diberikan kepada Komisi, pembunuhan terus berlangsung sampai akhir 1977 dan memasuki 1978 di Herluli dan beberapa tempat lain. Laporan-laporan ini menyatakan bahwa para anggota senior Fretilin dan Falintil terlibat langsung dalam pembunuhan, dengan nama-nama yang sering muncul antara lain M172, M176, M177, M178, dan M179. Selama sebuah pertemuan Komite Sentral di Ailaran, sekitar 10 kilometer dari Metinaro (Dili), pada Oktober 1977, Alexandre Lemos, yang bekerja sebagai teknisi pada radio Fretilin, Radio Maubere, dilaporkan dipukuli hingga meninggal oleh M172.³⁹⁹ Sekitar waktu-waktu ini M172 juga dilaporkan membunuh salah seorang pengawalinya yang bernama Alik di Beutlala, Liurai (Remexio, Aileu). Alik diikat dan digantung sebagai seorang pengkhianat.⁴⁰⁰ Kemungkinan besar dalam waktu yang sama, lima orang lagi, Moises, Mataran, Gaspar, Mauduan, dan Beremau dari Lacro (Manatuto), dilaporkan dibunuh atas perintah M176 di dekat Renal di Nundamar. Sebelum dibunuh, kelima orang ini disuruh menggali lubang kubur mereka sendiri berbentuk “T” (huruf awal dari kata “*traidor*” = pengkhianat).⁴⁰¹

389. Selain pembunuhan-pembunuhan di Herluli dan Aikurus, Komisi juga diberitahu beberapa pembunuhan dan kematian dalam tahanan lainnya yang terjadi di wilayah Remexio selama periode ini. Ananias da Silva, sekretaris Zona Remexio yang dipecat, wakilnya, Tobias Mendonça, dan Beremau, seorang *delegado* Fretilin, ditangkap oleh komandan Fretilin M180 dan pasukannya di Aimetalau, Remexio, sekitar Agustus 1977. Mereka ditahan di Furi, Faturasa (Remexio, Aileu), tempat dua anggota Komite Sentral, Mário Bonifacio dan Diogo Moniz, juga ditahan di sana. M172 dilaporkan memukuli Diogo Moniz dan Ananias da Silva, dan Diogo

* Domingos Maria Alves (Ambulan) mengatakan kepada Komisi bahwa setelah 20 Agustus “setiap minggu nama saya ada dalam daftar orang-orang yang akan dibunuh, tetapi ketika kami tiba di tempat pembunuhan, nama saya tiba-tiba diabaikan dan mereka memanggil seorang yang namanya di belakang saya” [Domingos Maria Alves (Ambulan), kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, Dili, 19-21 November 2003].

† Berbagai pernyataan terkait pembunuhan massal ini (Pernyataan HRVD 5807, 8100, 5812, dan 1502) menyebutkan total sepuluh korban: José Mendonça, João Nenito, Francelino Mendonça, Sebastião Castro, Manuel da Silva, Alarico, Zacarias, João Rumão, Eduardo, dan Domingos. *Communiqué* Komite Sentral tanggal 19 September menuduh Domingos Simões mencoba membunuh Alarico Fernandes pada 7 Agustus 1977 (“A Nossa Victória”, h. 19).

Moniz juga dilaporkan dibakar dengan arang panas. Ananias da Silva dan Beremau dilaporkan meninggal karena perlakuan selama ditahan.*

390. Pada tanggal yang tidak diketahui pada 1977, M172 memerintahkan penangkapan terhadap dua orang perempuan, Ilda Mendonça dan Dominggas, pegawai kantor OPMT di Aimetalau (Raimerhei, Remexio, Aileu). Mereka dituduh pengkhianat. Mereka dibawa ke markas Fretilin yang terletak tempat yang disebut Kaitasu (Aileu). Ilda Mendonça digantung mati, sementara Dominggas dipentungi oleh M172 hingga tak sadarkan diri, tetapi selamat.⁴⁰²

391. Komisi menerima laporan tentang pembunuhan-pembunuhan di daerah Lebutu (Hautuho, Remexio, Aileu). Pada 1976 Komandan Sektor M179 memerintahkan penangkapan Gaspar yang ia tuduh sebagai pengkhianat. Ia dibawa ke Lebutu (Aileu), tempat ia dipenjarakan dalam lubang di tanah. Setelah dua hari ia dibawa keluar lubang itu dan ditembak mati.⁴⁰³ Pada 15 Agustus 1978 Falintil dilaporkan membunuh lima orang lagi di Lebutu: Ana Maria Soares, Domingos Savio dos Santos dan istrinya, Elsa da Luz, João, dan seorang berusia 16 tahun yang tak diketahui identitasnya.⁴⁰⁴

392. Pembunuhan dan kematian dalam tahanan juga dilaporkan terjadi di Liquidoe, Subdistrik Aileu, tempat Fretilin memindahkan banyak penduduk untuk tinggal di bawah kontrol mereka awal 1977.⁴⁰⁵ Beberapa penangkapan dilaporkan terjadi subdistrik ini pada Agustus 1977 yang berakhir dengan pembunuhan, kematian dalam tahanan, dan penghilangan.⁴⁰⁶

393. Komisi juga menerima kesaksian tentang sejumlah kematian baik karena eksekusi maupun penganiayaan di Laclo (Manatuto). José Vicente (juga diidentifikasi sebagai Vicente Rodrigues Pereira), mantan sekretaris Zona Laclo, dan wakilnya, Antonio Heu, disebut sebagai “pengkhianat” dalam *communiqué* 19 September 1977. Bersama beberapa orang lain, termasuk Thomás de Carvalho, Frederico de Carvalho, dan Felipe dos Santos, mereka dilaporkan ditangkap di Zona Modok (Laclo). Mereka ditahan di markas besar zona di Aslaran (Uma Kaduak, Laclo), tempat mereka dilaporkan meninggal setelah dipukuli dan dibakar oleh para tentara Falintil di bawah pengawasan Komandan Zona, M150, wakilnya, M157, seorang komandan kompi, M226, dan wakilnya, M237, yang dilaporkan bertindak atas perintah M176 dan *Adjunto* M178.⁴⁰⁷

394. Seorang lain yang ditahan di Aslaran pada 1977, Thomás Antonio Ribeiro, mengatakan kepada Komisi bahwa ia ditahan di sana bersama lima anggota keluarganya, Antonio, Domingos, Marçal, Orlando, dan João, setelah mereka disebut pengkhianat oleh *Adjunto* M178 dan *Adjunto* M177. Selama berada dalam tahanan, mereka tidak diberi makan. Thomás Antonio Ribeiro menjadi satu-satunya anggota kelompok itu yang selamat.⁴⁰⁸

* Pernyataan HRVD 5811, 9120, 4815, dan 4882; dan Wawancara CAVR dengan Antonio Amado de Jesus Ramos Guterres, Lacló, Manatuto, 6 November 2003. Menurut Pernyataan HRVD 9120, Ananias da Silva meninggal setelah luka besar di kakinya akibat -penyiksaan dikerubungi belatung; cerita yang lain menyatakan bahwa gigitan ular yang tidak diobatilah yang membunuhnya (Pernyataan HRVD 4882).

395. Meskipun Turiscaí (Manufahi) yang merupakan kampung Francisco Xavier do Amaral diidentifikasi oleh Komite Sentral sebagai daerah yang paling subur dukungannya bagi Presiden Fretilin, hampir semua tahanan dari Turiscaí yang meninggal selama pembersihan, menemui ajal mereka di Aileu. Namun, dalam sebuah kasus yang dilaporkan kepada Komisi, anggota-anggota sebuah kelompok tahanan dari Aileta (Liurai, Aileu) meninggal karena penganiayaan atau dibunuh di Turiscaí. Seorang komandan Fretilin, M193, memerintahkan pasukan Fretilin menangkap Manuel Oliveira di Ailetaon karena dicurigai menjadi pengkhianat yang ingin membawa orang-orang Aileta untuk menyerah kepada ABRI. Komandan itu memerintahkan agar Jeronimo yang berasal dari Dili dibunuh. Ketika hal itu terjadi, deponen bersama enam orang lainnya pergi ke Turiscaí, berharap dapat memberitahukan kepada Francisco Xavier do Amaral tentang apa yang terjadi. Setelah mereka berada di Turiscaí selama seminggu, Komandan M193 tiba dan menangkap mereka. Mereka ditahan dalam ruangan kecil selama tujuh hari. Pada hari kedelapan mereka diperbolehkan keluar dan diperintahkan mencari makanan di hutan bagi para pasukan Fretilin. Beberapa hari kemudian, salah seorang anggota kelompok, Henrique dari Dili, dibunuh oleh M195 dengan sebuah tombak. Seorang anggota kelompok yang lain, Maunfoni, meninggal karena sakit yang tidak diobati. Setelah empat bulan para deponen dibebaskan dan kembali ke Liurai.⁴⁰⁹

396. Komisi juga menerima cerita tentang pembunuhan di Laclubar dan Barique (Natabora, Manatuto) juga diidentifikasi sebagai daerah-daerah pendukung Amaral, dan di Metinaro (Dili) pada 1977-78, yang sangat mungkin merupakan bagian dari kampanye anti-Amaral. Namun, tidak cukup perincian dalam pernyataan-pernyataan itu untuk menentukan apakah kematian-kematian ini sesungguhnya berhubungan dengan kampanye melawan Amaral dan para pendukungnya di daerah-daerah tersebut.⁴¹⁰

Pembunuhan dan kematian dalam penahanan dari para tahanan yang dipindahkan ke Ermera dan Viqueque

397. Karena Indonesia terus maju ke wilayah ini pada awal 1978, banyak tahanan dipindahkan dari Renal di Remexio ke tempat-tempat penahanan di berbagai tempat. Satu kelompok tahanan berjumlah 10-15 orang dipindahkan ke Distrik Ermera, mula-mula ke Sare (Hatulia) lalu ke Abat di Subdistrik Fatubessi.⁴¹¹ Sekelompok yang lain berjumlah 30 tahanan, termasuk di dalamnya Francisco Xavier do Amaral, dievakuasi ke timur melalui Barique dan Natarbora di Manatuto dan lalu ke Distrik Viqueque.⁴¹² Beberapa anggota kedua kelompok ini selamat; tetapi yang lainnya tidak.⁴¹³ Setidaknya lima orang anggota dari kelompok yang berangkat ke Ermera, termasuk Mário Bonifacio do Rego dan Domingos, dibunuh di tempat bernama Kakehe Mota Laran (Fatubessi, Ermera).⁴¹⁴ Tiga tahanan yang lain dari Ermera, Maliban, Bernadino, dan Leki Liban, dibawa oleh seorang assistente bernama M282 dan dihilangkan.⁴¹⁵

398. Setelah perjalanan yang sulit melewati Cairui, Barique, Natarbora (di Manatuto), dan Uaimori (Viqueque), kelompok tahanan yang dievakuasi ke timur bersama Francisco Xavier do Amaral ini akhirnya ditahan di Renal di Wesoko di

wilayah Cai-Ua (Dilor, Lacluta, Viqueque) tempat Komisariat Sektor Timur Bagian Tengah (Cascol) telah mendirikan basis baru setelah Konferensi Laline.⁴¹⁶ Di sana mereka bergabung dengan sejumlah tahanan lain dari wilayah Viqueque.*

399. Komisi telah menerima nama keempat belas orang yang tidak selamat dalam perjalanan ke Wesoko. Mereka adalah: João Bosco, Domingos Mendonça (suami dari Ilda Mendonça, yang digantung di Kaitasu), Mauhui, Maumali, Vicente, Berloek, Mauleki, Maune Fatu, Mateus, José Karamba, José dos Santos, Leki Timur, Lequibere, dan Mateus Mendonça.⁴¹⁷ Mereka yang melaporkan kematian ini kepada Komisi tidak mengetahui bagaimana para korban meninggal. Penderitaan yang berlangsung selama perjalanan ke Wesoko dan kemudian evakuasi para tahanan dari Renal di Lacluta ke pantai selatan Viqueque karena dikejar oleh pasukan Indonesia, kemungkinan besar telah merenggut banyak nyawa korban ini, sebanyak yang dilaporkan meninggal dalam perjalanan dari Turiscaí ke Aikurus setelah penangkapan terhadap Xavier do Amaral dan para pengikut terdekatnya pada September 1977.†

Pembunuhan dan kematian dalam penahanan dari para tahanan di distrik-distrik bagian timur

400. Pembunuhan orang-orang yang dituduh bekerjasama dengan Francisco Xavier do Amaral menyebar ke timur. Selain kematian dari mereka yang dipindahkan ke Viqueque dari distrik-distrik Manufahi, Aileu, dan Manatuto bersama dengan Francisco Xavier do Amaral (lihat paragraf 348 di atas), orang-orang dari distrik Viqueque, Baucau dan Lautém, termasuk beberapa orang yang telah ditahan sejak tindakan keras terhadap Aquiles Freitas dan para sekutu beserta pengikutnya setahun sebelumnya, penduduk lokal juga menjadi korban dari tindakan kekerasan itu. Pembunuhan-pembunuhan yang dilaporkan kepada Komisi dilakukan di Uatolari (Viqueque), Quelicai (Baucau), dan Luro (Lospalos, Lautém). Tak seperti yang terjadi di bagian lain dari Timor-Leste, campurtangan pejabat senior Fretilin, khususnya Xanana Gusmão, menghentikan pembunuhan yang terjadi pada Desember 1977. Menurut sebuah sumber, pada 17 Desember 1977 Sekretaris Zona 17 Agustus, João Meneses, memerintahkan agar pembunuhan dihentikan, dengan mengatakan bahwa selanjutnya kamp-kamp akan digunakan untuk pendidikan dan rehabilitasi dan bukan untuk pembunuhan.⁴¹⁸

* CAVR, Profil Komunitas Desa Ahic, Subdistrik Lacluta, Distrik Viqueque menyebutkan José Monteiro (mantan komandan Region Viqueque), Antonio Guterres (dari Ossu), dan Lourenço dos Reis Amaral (dari Luca) sebagai tahanan yang ditahan bersama dengan Francisco Xavier do Amaral di Wesoko.

† Saat itu Komite Sentral Fretilin memutuskan bahwa Francisco Xavier do Amaral dan 20 orang lainnya, termasuk Diogo Monis, harus dikirimkan ke Centro Leste. Di mana mereka berhenti, para tahanan harus menggali lubang untuk mereka sendiri. Di Uaimori (Viqueque), Francisco Xavier do Amaral harus tinggal di dalam salah satu dari lubang-lubang ini selama 1-2 minggu karena ABRI mendekat. Diogo Monis selamat, dan merupakan bagian dari kelompok yang ditangkap oleh ABRI bersama dengan Francisco Xavier do Amaral di pantai selatan Viqueque pada 1978. (Lihat Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili 18 Juni 2004)

401. Pada Oktober 1977 Fernando da Sousa, Sekretaris Zona di Uato Carbau (Viqueque) dan beberapa orang lain ditangkap dan dibunuh di Uatolari (Viqueque) sebagai tertuduh pendukung Amaral. Pada tahun saat ia ditangkap dan dibawa ke Lobito dengan Aquiles Freitas, Fernando da Sousa diberi pendidikan politik dan ditunjuk sebagai Sekretaris Zona. Ia dituduh oleh komandan Uato Carbau, David Lebre, telah mengadakan kontak dengan ABRI untuk membicarakan tentang penyerahan diri.⁴¹⁹ Menurut seorang informan yang ditahan bersama dengan 23 orang lainnya dalam sebuah kandang babi di Zona 17 Agustus (Zona Bautae) di Uatolari atas perintah tiga orang delegado, M238, M239, dan M240, di antara mereka yang dieksekusi terdapat tiga perempuan bernama Alice, Angelina, dan Coubae, yang dibawa dan dieksekusi di tengah malam. Menurut sumber lain, Alice dicurigai karena telah menerima surat dari keluarganya di kota.⁴²⁰ Ketiga orang delegado ini jugalah yang dilaporkan membunuh Fernando da Sousa.⁴²¹ Keputusan untuk membunuh Fernando de Sousa dilaporkan didelegasikan ke tingkatan Zona oleh tingkatan yang lebih tinggi dalam pemerintahan Fretilin.⁴²²

402. Selain Fernando da Sousa dan ketiga perempuan itu, Komisi juga diberitahu tentang 15 orang lain yang dibunuh atau meninggal sebagai akibat penganiayaan kejam di Zona 17 Agustus selama periode ini: Mateus Alves (seorang komandan peleton Falintil), anak laki-laknya, Agostinho, Lino Mau-Saba (seorang tentara Falintil), Mário Mascarenhas (dari Seksi Propaganda Politik Zona), Loi-Siba, Sousa, Germano Xavier, Se-Boro, Germano dos Santos, Labi-Cati, Lobo-Loi, Mateus Cabral, Naua-Cai, Co'o-Nau, dan Uato-Labi (kedelapan yang terakhir berasal dari Quelicai). Semuanya anggota Fretilin atau Falintil.⁴²³ Pembunuhan-pembunuhan ini dilaporkan dihentikan dan 300 atau lebih tahanan di markas itu dibebaskan setelah Xanana Gusmão menegur para pemimpin setempat tentang perlakuan mereka terhadap para tahanan.⁴²⁴

403. Pada sekitar saat ini juga, dua kelompok pejabat tinggi Fretilin dan Falintil ditangkap sebagai "agen-agen Xavier". Pada 19 Desember sekelompok komandan dari wilayah timur dan para pejabat Fretilin, termasuk Komandan Sektor Ponta Leste, José dos Santos, wakilnya, Pedro Sanches, Sekretaris Regional Ponta Leste, dua saudara laki-laki Pedro, Afonso Savio dan Benedito Savio, Adão Amaral, Gil Fernandes, Raul dos Santos, dan Victor Gandara, dipanggil ke sebuah pertemuan di markas Unit 3 (Unidade Tres) di Gunung Matebian, tempat mereka ditahan atas perintah tiga anggota Komite Sentral Fretilin, M208, M209, dan M210. Sebuah kelompok kedua, termasuk di dalamnya José da Conceição, Dínis de Carvalho, dan João Ernestino de Andrade Sarmento, ditangkap segera setelah itu.⁴²⁵ Hanya satu dari para tahanan ini, José dos Santos, lolos dari pembunuhan, meskipun semuanya dilaporkan disiksa secara kejam. Komisi menerima kesaksian bahwa tak lama sebelum semuanya yang lain dibebaskan, José dos Santos ditelanjangi, kemudian dipukuli dan dibakar sebelum ditembak mati.⁴²⁶ Yang lainnya dibebaskan setelah Xanana Gusmão sekali lagi campurtangan dengan rekan-rekannya dari Komite Sentral dan militer.*

* Sarah Niner (ed), *To Resist is to Win! The Autobiography of Xanana Gusmão*, h. 50; dan Pernyataan HRVD

404. Di Quelicai orang-orang yang dicurigai sebagai simpatisan pro-Amaral atau hanya karena merencanakan menyerah juga dibunuh selama bulan-bulan ini. Beberapa di antaranya dibunuh di desa mereka. Pada 20 Oktober 1977 komandan setempat, M200, dilaporkan membunuh *liurai* Uaitame, Francisco Moreira, dan dua *chefe de povoação*, Francisco Urbano Moreira dan Manuel dos Santos, karena dicurigai menyuruh orang-orang Uaitame menyerah. M200 dan unitnya juga dilaporkan membunuh sepuluh pengurus Fretilin di Laisorolai (Quelicai), termasuk dua orang yang bernama Lucas dan Paulo.⁴²⁷

405. Orang-orang yang lainnya dibawa ke markas Zona 15 Agustus (Zona 15 de Agosto) di Osso-Mesa (Bualale, Quelicai) atau dikirim ke Zona 17 Agustus (Zona 17 de Agosto) di Bautae (Uatulari). Pada September 1977 seorang komandan Falintil, Manuel, dan seorang bawahannya, Ricardo, ditangkap di wilayah Akauata (Uaioli, Venilale, Baucau) oleh unit Falintil yang dipimpin oleh M211. Mereka dibawa ke markas Zona 15 Agustus tempat mereka ditahan dalam sebuah kandang bersama lima orang tahanan lainnya selama 30 hari. Keduanya mengalami pemukulan yang hebat selama enam hari dan berkali-kali tak sadarkan diri saat diinterogasi tentang tuduhan tindakan mereka sebagai mata-mata bagi Indonesia. Pada suatu sore di November 1977, sekitar pukul 19.00, enam tahanan—Alexandre, Loi-Tai, Clementino, Modo-Olo, Joaquim, Luliba, dan Loi-watu—dibawa, menurut dugaan untuk menerima sebuah pendidikan politik tentang doktrin Fretilin. Mereka tidak pernah tampak lagi.⁴²⁸ Seorang deponen yang lain, Cecilia da Costa, melaporkan kasus Naha Boru Kili yang ditangkap di kebunnya dan dibawa ke markas Zona Bautae tempat ia ditahan selama tiga bulan, dan dipukuli dan ditendang berkali-kali hingga meninggal.⁴²⁹

406. Komisi menerima nama 16 orang lainnya yang dilaporkan dibunuh atau hilang di markas Zona 15 Agustus pada Oktober 1977:

1. Manuel dos Santos (Lorico)
2. Mano-Sala
3. Gamo-Sala
4. Ce-Boro (Celestino)
5. Co'ò-Quele
6. Gamo-Quele
7. Ano-Quele
8. Bernadino (Tai-Loi)
9. Afonso (Dara-Cai)
10. João dos Santos
11. Nuno Belo

0095. Semua yang selamat kemudian menghilang pada 1979 kecuali, Gil Fernandes, José da Conceição, dan Dinis de Carvalho, selama kampanye Indonesia melawan para mantan pemimpin Fretilin dan para komandan Falintil (lihat 7.2.3.4).

12. Rafael Ximenes
13. Venancio Ximenes
14. Rai-Loi
15. Sedelizio dos Santos
16. Cosme Sarmiento.⁴³⁰

407. Pada November 1977, segera setelah berita penangkapan Xavier do Amaral sampai ke Lautém, seorang saksi lainnya, Zeferino Freitas, ditahan dua kali di Luro (Lautém). Untuk kedua kalinya ia ditangkap oleh anggota Komite Sentral dan *adjunto* M242, dan dibawa bersama seorang tahanan lainnya, Cristovão, beserta keluarga mereka ke Lalapu (Lore I, Lospalos, Lautém) lalu ke Kaulai di perbatasan Lore I dan Iliomar. Serangan militer Indonesia di daerah ini memaksa mereka menyingkir ke Besi Manas di Subdistrik Luro bersama tiga orang tahanan lainnya: Oracio Savio, Alcino Savio, dan Julião. Keempat puluh lebih tahanan yang ditahan di Besi Manas saat itu mengalami pemukulan terus-menerus dan hanya menerima satu kali makan sehari dalam jumlah yang sangat sedikit. Dalam bulan di mana mereka ditahan di sana, dua orang tahanan, Julião dan Cristovão, dilaporkan meninggal akibat pemukulan. Para saksi menghubungkan pembebasan para tahanan dengan kedatangan *adjunto* Xanana Gusmão.⁴³¹

Pembunuhan dan penghilangan nonpetempur oleh Fretilin/Falintil

408. Komisi menerima banyak sekali kesaksian tentang pembunuhan atau kematian yang dilakukan dalam cara yang lain terhadap orang-orang yang dicurigai menjadi mata-mata ABRI. Banyak dari kasus-kasus ini sulit dijangkau, meskipun tanggal dan tempat kejadiannya sering menunjukkan bahwa mungkin kasus-kasus ini berhubungan dengan konflik politik internal dalam Fretilin.⁴³² Namun, juga terbukti bahwa orang-orang sering dituduh berhubungan dengan Indonesia hanya karena mereka ingin menyerah atau terlibat dalam kontak yang biasa dengan teman atau kerabat di wilayah-wilayah yang dikontrol Indonesia.

Kematian dan pembunuhan dalam Renal dan pusat-pusat penahanan Fretilin lainnya

409. Komisi menerima banyak kesaksian yang menggambarkan pengalaman mengerikan dari para tahanan yang ditahan di Renal dan di pusat-pusat penahanan lain yang dijalankan oleh Fretilin. Komisi menerima sejumlah kesaksian yang menggambarkan korban-korban yang ditangkap sebagai pengkhianat dan kemudian meninggal akibat penganiayaan, dibunuh, atau dihilangkan.⁴³³ Sering korban dari perlakuan ini adalah warga sipil biasa, anggota Fretilin, atau prajurit Falintil. Seperti yang terjadi pada korban-korban dari tingkat yang lebih tinggi, dalam beberapa kasus di mana warga biasa menjadi korban pembersihan, para pemimpin senior Fretilinlah yang memerintahkan pembunuhan para korban.

410. Sejumlah besar kesaksian ini menceritakan kematian dalam tahanan karena penganiayaan dan deprivasi, dan juga tentang pembunuhan dan penghilangan.⁴³⁴ Terkadang para tahanan dihukum melalui suatu bentuk pengadilan yang kasar, yang bukannya melindungi hak-hak sang tersangka, malah nyata sekali melanggar hak-hak mereka dengan menjadikan para tersangka sebagai sasaran interogasi yang secara rutin melibatkan pemukulan, pembakaran dengan besi panas, penggantungan di pohon, dan berbagai jenis penganiayaan, serta sebagai sasaran proses “*justica popular*” (pengadilan rakyat) seketika. Antonio Amado de Jesus Ramos Guterres, yang hadir dalam berbagai interogasi sebagai jurucatat, menggambarkan interogasi-interogasi itu sebagai berikut: “Korban-korban dipaksa mengakui sesuatu yang tidak mereka ketahui samasekali dan menyebut orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kasus [yang sedang diselidiki]”⁴³⁵

411. Apakah seorang tahanan hidup atau meninggal, dalam pengertian tertentu berlangsung secara sewenang-wenang. Kondisi Renal beragam tetapi hampir selalu mengancam kehidupan, karena makanan, tempat bernaung, perawatan medis, dan sanitasi yang diberikan kepada tahanan biasanya sangat tidak memadai; ketidakmemadai ini tampaknya merupakan bagian hakiki dari rezim penjara. Mereka yang meninggal dalam penahanan mungkin saja ditangkap karena kejahatan berat pengkhianatan atau karena kesalahan yang kecil saja seperti mencuri kecil-kecilan atau tertangkap sedang mencari makan di daerah terlarang. Mereka mungkin juga ditangkap hanya karena mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lainnya dengan orang yang dianggap bersalah karena telah berkhianat atau karena kejahatan lainnya. Sifat dari pengadilan di mana para tahanan menjadi terdakwa dengan sendirinya berarti bahwa keputusan menyangkut nasib para tahanan sering menjadi sangat pribadi: kehendak hati seorang pemimpin atau komandan dapat menentukan apakah seorang tahanan hidup atau mati.’

412. Komisi mendengarkan kesaksian tentang sistem peradilan dari seorang *Assistente Fretilin* yang mengingat:

*[O]rang yang bersalah akan dibawa ke depan umum. Setelah di sana banyak orang akan mengatakan bahwa ia bersalah, tidak ada orang yang akan membantah putusan itu, meskipun orang itu tidak bersalah; tidak ada hakim membela kita...Saya pernah menyaksikan kurang lebih tiga kasus, di mana orang dicurigai dan ditangkap di Zona Gerilya, dan komandan menuduhnya sebagai mata-mata. Komandan itu berkata: “orang ini kami tangkap di Zona Gerilya, dia adalah mata-mata.” Rakyat lalu mengatakan “Kalau dia mata-mata dia harus mati.” Dalam kasus-kasus seperti ini biasanya yang menangani adalah komandan Falintil dan rakyat hanya mengikuti apa tuduhannya.*⁴³⁶

* Selain campurtangan Xanana Gusmão dan orang-orang lain selama pembersihan para pengikut Amal di timur, kejadian serupa juga digambarkan dalam Pernyataan HRVD 2195 (Liquiça) dan wawancara CAVR dengan Elias Quintão, Laclubar, Manatuto, 1 Oktober 2003.

413. Eksekusi segera di depan umum, yang dilakukan dengan sekejap-kejamnya, sering terjadi setelah pengadilan-pengadilan ini (lihat, sebagai contoh, cerita tentang pembunuhan di Herluli, paragraf 384 di atas). Para korban bisa saja dengan mudah dieksekusi secara sewenang-wenang tanpa menjalani masa tahanan dan suatu proses peradilan setelahnya.

414. Hampir semua kematian yang terjadi di Renal yang dilaporkan kepada Komisi bukan merupakan hasil proses peradilan semacam itu, di mana korban dihukum mati, melainkan sebagai akibat dari penganiayaan atau pembunuhan yang tidak didahului oleh proses peradilan apa pun.

415. Seorang deponen menggambarkan peristiwa seputar pembunuhan pamannya, Agapito Soares, di Laclo (Manatuto):

Pada bulan April 1979 paman saya, Agapito Soares, yang berumur 24 tahun dan merupakan seorang Fretilin dengan posisi sebagai Delegadu, dicurigai oleh M243, Komandan Fretilin M95, dan Komandan Fretilin M244 sebagai pengkhianat...Pada suatu malam sekitar pukul 12.00, M243, M95 dan empat orang anak buah M244 datang dengan senjata ke Fatukuak. [Mereka] mengikat tangan Agapito Soares dengan tali dan dibawa menghadap Komandan M244...Agapito Soares diikat pada sebuah pohon dan diinterogasi oleh Komandan M244...Lalu Komandan M244 menyerahkan Agapito Soares kepada M30, seorang [anggota] Fretilin asal Sanarin, Laclubar, untuk dibunuh. Atas perintah komandan M244, M30 membawa Agapito Soares berjalan kaki ke sebuah tempat di atas gunung, dengan tangan yang masih terikat... M30 menikam Agapito Soares dengan sebuah pisau...tiga tusukan di bagian rusuk kiri, tiga tusukan di rusuk kanan, dan satu tusukan di ulu hati. Agapito Soares masih sempat mengatakan kepada M30: "Saya tidak bersalah atas tuduhan kepada saya sebagai pengkhianat (traidor) yang bekerjasama dengan TNI." M30 menendang Agapito sekali di bagian perut. Agapito jatuh dan meninggal.⁴³⁷

416. Sebuah kasus yang menguatkan tentang kematian dalam penahanan dilaporkan terjadi di Ossu (Viqueque) pada 1977 mengandung unsur-unsur seperti yang digambarkan di atas.

417. Pada 1977, setelah seorang *liurai* bernama Gaspar Reis menyeberang ke kota Ossu (Viqueque) yang dikuasai oleh Indonesia, 11 orang, termasuk anak-anak, ditahan di Renal di Leki-Loho atas perintah *adjunto* M245 dan tiga orang asistennya, M246, M247, dan M248. Atas dasar pergaulan mereka dengan *liurai* Gaspar Reis, kesebelas orang itu dituduh menjadi mata-mata dan reaksioner. Mereka ditahan di dalam sebuah kandang babi. Selama ditahan, para tahanan dipukuli, ditampar, dan ditendang, dan diberi air garam untuk diminum. Dilaporkan bahwa akibat perlakuan ini setidaknya-tidaknya dua orang tahanan, Ologari dan Loi-Dasi, meninggal. Mereka yang selamat ditahan dalam kandang babi itu selama satu tahun empat bulan.⁴³⁸

418. Kasus-kasus kematian dalam tahanan sebagai akibat dari penganiayaan dilaporkan terjadi di Renal di Distrik Aileu, Manatuto, Viqueque, Liquiça, dan Dili.⁴³⁹

419. Dalam kasus lain, deponen melaporkan bahwa korban atau korban-korban menghilang setelah dibawa ke tahanan.⁴⁴⁰

420. Sebagaimana selama periode awal invasi (lihat bagian 3.3, paragraf 172 - 207), mendekatnya pasukan Indonesia dapat mengakibatkan Fretilin membunuh para tahananannya. Dua sumber melaporkan bahwa pada 1978 di Renal di Aikurus (Remexio, Aileu) para anggota Fretilin membunuh para tahanan dengan melemparkan granat ke dalam lubang tempat mereka ditahan. Istri dari salah seorang korban menyatakan:

*Kami mendengar bahwa ABRI akan menyerang tempat di mana Renal berada. Karena itu suami saya ditempatkan dalam lubang. Kemudian assistente, M249, melempar granat ke dalam lubang itu. Akibatnya suami saya, Mau-Sera, meninggal dalam lubang itu.*⁴⁴¹

421. Para tahanan yang ditahan dalam setidaknya-tidaknya satu Renal lainnya juga dilaporkan dibunuh atau hilang ketika pasukan Indonesia menyerang wilayah itu.⁴⁴²

422. Sebagaimana diisyaratkan oleh namanya, fungsi Renal yang sebenarnya adalah rehabilitasi melalui pendidikan politik terhadap orang-orang yang dituduh atas berbagai kejahatan, mulai dari yang bersifat ideologis seperti sikap reasioner sampai pelanggaran disiplin (lihat Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan).⁴⁴³ Hasil dari penahanan di sebuah Renal untuk “pendidikan politik” sering adalah kematian akibat penyiksaan, pembunuhan, atau penghilangan atas korban.⁴⁴⁴ Komisi diberitahu bahwa dalam beberapa kasus, para korban tidak menerima pendidikan politik yang seharusnya diberikan sebagai alasan penahanan terhadap mereka; dalam kasus-kasus ini, “dibawa untuk pendidikan politik” sebenarnya adalah eufemisme untuk pembunuhan atau penghilangan. Sebuah kasus serupa adalah penghilangan yang telah digambarkan tentang tujuh orang yang dibawa dari Zona 15 Agustus di Bualale (Quelicai, Baucau) pada November 1977 selama pembersihan orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung Francisco Xavier do Amaral.⁴⁴⁵ Kasus-kasus serupa dilaporkan dari Liquidoe (Aileu) dan Lacro (Manatuto) di Sektor Tengah Bagian Utara dan dari Quelicai di Sektor Tengah Bagian Timur.⁴⁴⁶

423. Miguel Soares dan sepasang suami-istri, Lorenço dan Albertina, ditangkap secara terpisah oleh para kader Fretilin di Lacro pada 1977. Mereka seolah-olah dibawa untuk pendidikan politik. Baik Lorenço maupun Albertina tidak menerima pendidikan politik. Sebaliknya, mereka dibawa Hatuconan (Lacro, Manatuto), tempat mereka disiksa dan diperintahkan untuk melaksanakan kerja paksa. Keduanya selamat. Namun, Miguel, yang juga dibawa ke Hatuconan “untuk pendidikan politik”, disiksa dan sesudah itu menghilang.⁴⁴⁷

424. Apa yang tampaknya merupakan murni perbedaan ideologis dapat juga menjadi alasan penghukuman sebagai pengkhianat yang diikuti oleh pembunuhan. Sekelompok guru, Antonio dos Santos, Domingos Temenai, Jorgé, Domingos Pereira

Montalvão, dan Domingos Sousa ditahan di Renal dekat Metinaro (Dili), tempat mereka meninggal atau dibunuh. Menurut deponen, mereka ditahan terutama karena penentangan mereka terhadap doktrin Fretilin menyangkut hak milik.⁴⁴⁸

Pembunuhan berhubungan dengan warga sipil yang menyerah kepada pasukan Indonesia

425. Komisi menerima informasi tentang kejadian di mana warga sipil yang dicurigai berencana menyerahkan diri, sedang dalam tahap menyerahkan diri, atau yang telah menyerah, meninggal dalam tahanan setelah ditangkap atau dibunuh.⁴⁴⁹

426. Para anggota Fretilin, pasukan Falintil, dan warga sipil biasa yang dicurigai berencana menyerah dapat ditangkap, yang dapat berakhir pada kematian mereka. Kecurigaan terhadap orang-orang yang berencana menyerah dapat saja beralasan dan dapat juga tidak beralasan. Sering alasan penangkapan dan pembunuhan setelahnya hanya karena hubungan korban dengan orang lain yang diketahui memang berencana menyerah.

427. Pada 1979, karena kelaparan, Elizio memutuskan menyerah kepada ABRI. Rencananya terbongkar dan ia ditahan di Talik-Wetin (Uma Beco, Barique, Manatuto). Tak lama berselang, kedua orangtuanya, Camilo dan Faustina, tiga adiknya, dan dua temannya, Estevão dan Mateus, juga ditangkap. Saat mereka ditahan di Talik-Wetin, Estevão dan Mateus ditembak mati.⁴⁵⁰

428. Di wilayah-wilayah ketidaksepahaman tentang apakah sebaiknya menyerah atau tidak sangat parah dan tekanan dari militer Indonesia menjadi semakin hebat, seperti di Sektor Perbatasan Utara (Sector Fronteira Norte) pada akhir 1978, keluarga dari orang-orang yang telah ditangkap atau telah menyerah bisa saja dicurigai. Dalam Oktober 1978, Di Matata (Railaco, Ermera) dua prajurit Falintil, Felix da Conceição dan Domingos Terlego, dicurigai ingin menyerah tak lama setelah ibu Felix, Alda Exposto, dan sepupunya, Agapito, ditangkap oleh ABRI di Leorema (Bazartete, Liquiça). Sekretaris Fretilin, M250, dan seorang komandan seksi (*commandante de seccão*), M251, memerintahkan pasukan Falintil untuk menangkap keduanya. Mereka ditembak dan diparang sampai mati di Sungai Tihar di Matata.⁴⁵¹

429. Dalam beberapa kasus, korbannya adalah para pemimpin Fretilin atau Falintil setempat atau anggota yang mendorong penduduk sipil untuk menyerah.

430. Pada 1978 di Railaco (Ermera), karena penduduk sipil kelaparan, *delegado* mereka, Eduardo Madeira Soares, menyuruh penduduk menyerah. Karena tindakan ini, dua anggota Falintil menahan dan membunuhnya di Fatumere (Taraso, Railaco) sebagai pengkhianat.⁴⁵²

431. Informasi bahwa seseorang berencana untuk menyerah mungkin tidak berdasar, tetapi tetap dapat berakibat pembunuhan. Dalam beberapa kejadian, ada juga petunjuk bahwa orang dibunuh hanya untuk mengecilkan hati mereka yang ingin menyerah.

432. Pada April 1977, segera setelah basis Fretilin di Tatabei (Atabae, Bobonaro) direbut oleh Indonesia, yang menyebabkan banyak penduduknya terpancar, komandan Fretilin, M252, dan *assistente*, M253, di Guico (Maubara, Liquiça) memerintahkan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki, Lacu Ana, Mateus, dan Mau-Busa, rupanya setelah mereka menerima informasi yang salah bahwa ketiga orang ini berencana menyerah. Walaupun mereka mati-matian menyangkal di bawah interogasi bahwa mereka merencanakan menyerah, ketiganya tetap dibunuh.⁴⁵³

Pembunuhan selama penyerahan diri

433. Orang-orang yang memang mengambil langkah untuk menyerah juga menghadapi eksekusi jika mereka tertangkap oleh pasukan Falintil.

434. Pada 1977 sebuah keluarga memutuskan menyerah setelah dua orang bibi mereka terbunuh selama serangan udara pihak Indonesia. Namun saat mereka berjalan turun untuk menyerah, mereka tertangkap oleh dua orang prajurit Falintil di Raiketan (Covalima). Para prajurit itu membawa mereka ke pinggir sebuah sungai dan menembak mati tiga di antara mereka. Seorang deponen selamat hanya karena ia terjatuh ke sungai dan terbawa arus ke tempat yang aman.⁴⁵⁴

435. Pada 1978 Zeferino Freitas dan keluarganya bersembunyi di Gunung Matebian. Orang-orang di gunung itu diserang tanpa belas kasihan oleh militer dari darat, laut, dan udara. Keluarga itu memutuskan turun gunung dan menyerah. Mereka bergerak ke arah Gunung Builo (Ossu, Viqueque). Dalam perjalanan, lima anggota Falintil menghentikan mereka dan membunuh salah satu anggota kelompok yang mereka tuduh sebagai mata-mata Indonesia.⁴⁵⁵

Pembunuhan setelah penyerahan diri

436. Komisi juga menerima beberapa kesaksian tentang pembunuhan oleh Fretilin/Falintil terhadap orang-orang yang menyerah kepada Indonesia segera setelah invasi.

437. Sebuah keluarga yang berjumlah sekitar 12 orang diperbolehkan ABRI untuk menetap di Kota Manatuto tanpa dikawal setelah menyerah di Casohan (Barique, Manatuto) pada 1976. Belum sempat mereka meninggalkan wilayah Barique, mereka telah ditangkap oleh delapan Falintil yang mengambil barang milik mereka dan membawa mereka ke pos Falintil. Mereka mengikat salah seorang anggota keluarga itu, Leonardo, ke pohon beringin dan menyiksanya dengan mengikis wajahnya dengan pisau. Pada tengah malam mereka membawa pergi Leonardo dan membunuhnya. Anggota keluarga lainnya dapat melarikan diri dan menuju ke Manatuto ketika pos Falintil itu diserang oleh pasukan Indonesia.⁴⁵⁶

438. Hampir semua penduduk Desa Raça (Lospalos, Lautém) menyerah kepada pasukan Indonesia segera setelah ABRI memasuki Lospalos pada Februari 1976. Setelah pendudukan Indonesia atas Raça, orang-orang di desa itu menderita baik di tangan pasukan ABRI maupun Falintil. Selama waktu-waktu ini, baik ABRI

maupun Falintil dilaporkan telah membunuh para penduduk desa yang dicurigai bekerja dengan pihak lawan.⁴⁵⁷

439. Pasukan Falintil setempat menolak keputusan sejumlah besar penduduk dari Subdistrik Bobonaro untuk turun dan menyerah kepada pasukan Indonesia di Kota Bobonaro pada Februari 1976. Pasukan Falintil dilaporkan menembak mati beberapa dari mereka yang menyerah.*

440. Komisi menerima informasi tentang korban yang setelah menyerah diperintahkan oleh ABRI, Hansip, atau anggota pegawai sipil untuk kembali ke pedalaman dan membujuk orang-orang yang masih bersikeras untuk tidak menyerah, dan mereka dibunuh oleh Falintil ketika mereka melakukan perintah tersebut.

441. Pada Februari 1976, M254, Camat Moro (Lautém) waktu itu, memerintahkan empat laki-laki dari *aldeia* Soloresi (Maina I, Moro), Albino da Cruz, Koupono, Celestino, dan Tito, untuk membujuk orang-orang Payahara keluar dari hutan dan berpindah ke Soloresi. Ketika keempat orang ini mencapai Payahara, mereka ditangkap oleh sekelompok pendukung Fretilin yang dipimpin oleh M255. Celestino dan Tito berhasil melarikan diri, tetapi Albino da Cruz dan Koupono dilaporkan dibawa ke sebuah wilayah hutan di Leuro (Lospalos, Lautém), tempat mereka dibunuh.⁴⁵⁸

442. Ayah seorang deponen ditangkap oleh ABRI di Colocau (Wetare, Besusu, Uma Berloik, Alas, Manufahi) pada 1978. Ia dibawa ke kamp transit di Uma Metan (Mahaquidan, Alas) (lihat Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan) dan diperintahkan mencari anggota keluarganya yang lain yang masih di hutan. Saat ia berada di hutan ia dibunuh atas perintah *adjunto* Fretilin, M256, karena dicurigai sebagai mata-mata ABRI.†

443. Orang-orang yang kembali bergabung dengan gerakan Resistansi setelah sebelumnya menyerah atau ditangkap oleh Indonesia juga dapat dicurigai sebagai mata-mata bagi Indonesia. Pada Februari 1976 Miguel Marques, yang telah menyerah kepada Indonesia, mencuri sejumlah senjata dari ABRI dan kembali ke hutan untuk bergabung dengan gerakan resistansi. Di hutan ia bertemu dua bekas rekan Falintilnya, M257 dan M258. M257 dan M258 membawa Miguel Marques ke basis mereka di Uaimori (Viqueque), menyerahkannya kepada tiga anggota Falintil yang lainnya, dan pergi. Ketiga orang ini membunuh Miguel Marques karena curiga ia mata-mata ABRI.⁴⁵⁹

444. Pada 1979, beberapa waktu setelah menyerah kepada Batalion 401 ABRI di wilayah Lacluta (Viqueque), Lauriano Marques, seorang pejuang Falintil memutuskan kembali ke hutan bersama adik laki-lakinya karena takut akan dibunuh oleh tentara batalion itu. Dia melarikan diri ke satu kesatuan Falintil, di mana tidak seorangpun

* Lihat wawancara CAVR dengan Suster Consuelo Martinez, Dili, 4 Juli 2003. Untuk gambaran yang menyeluruh, lihat Bab 7.4: Penahanan sevenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan.

† Pernyataan HRVD 4303. Nasib yang hampir sama dialami oleh Duarte Almeida dan beberapa orang lain pada 1979 (lihat Pernyataan HRVD 1587). Namun, dua laporan lain lagi tentang pembunuhan atau penghilangan terhadap Duarte Almeida mengatakan bahwa para pelaku bukanlah Fretilin melainkan Hansip di Alas di bawah komando Capela Ferrão (lihat Pernyataan HRVD 1506 dan 1576).

mengenalnya. Mereka mengikat dan membawa dia ke sebuah tempat yang disebut Halifutu Manu, tempat mereka mengeluarkan parang mereka dan membunuhnya. Mereka juga memarang leher adiknya, tetapi ia bisa selamat.⁴⁶⁰

445. Pembunuhan juga terjadi lama setelah penyerahan diri. Tidak jelas apa motif pembunuhan-pembunuhan ini: meskipun dalam beberapa kasus mereka yang ditargetkan adalah jelas-jelas bekerjasama dengan pasukan Indonesia, tidak selamanya kasus begitu.

446. Satu kasus yang jelas merupakan pembunuhan atas seorang kolaborator terjadi di Fuat (Iliomar, Lautém) pada 1979. Kepala Desa Fuat, Francisco Ferreira, pergi ke kebunnya bersama lima orang lainnya untuk memanen jagung. Anggota pasukan Falintil yang dipimpin oleh M270 menangkap, mengikat, dan membawa mereka ke sebuah tempat bernama Korufira, di luar Fuat. Mereka diberitahu bahwa mereka dapat saja diizinkan kembali ke desa mereka, tetapi jika mereka melakukan hal itu, Francisco Ferreira hanya akan menindas penduduk. Mereka kemudian dibawa ke suatu tempat bernama A'hasan, tempat M270 dan M271 membunuh Francisco Ferreira dan dua laki-laki lainnya.⁴⁶¹

447. Dalam banyak kasus lainnya, motivasi untuk membunuh tidaklah jelas. Setelah menyerahkan diri pada 1978, Artur Moreira dan keluarganya pergi mencari makanan. Mereka bertemu dengan seorang anggota Fretilin bernama M260, yang kemudian mengundang dua orang dari mereka, Gamulabi dan Koubou, untuk mencari makanan di Aldeia Titalari (Ililai, Moro, Lautém). Keduanya tidak pernah kembali lagi. Belakangan Artur Moreira diberitahu oleh salah seorang anggota Fretilin yang baru saja menyerah ke Indonesia bahwa Fretilin telah membunuh kedua orang tersebut.^{*}

448. Ketika pasukan Indonesia semakin meningkatkan operasi-operasi mereka terhadap gerakan Resistansi selama 1977 dan 1978, Fretilin sadar bahwa semakin sulit untuk mempertahankan basis-basis mereka. Di banyak wilayah, konsentrasi penduduk di bawah kepemimpinan Fretilin terpecah-belah seiring dengan semakin banyaknya anggota warga sipil yang terpancar ke wilayah-wilayah yang mereka anggap aman, atau yang menyerahkan diri.[†] Di beberapa wilayah, seperti Sektor Tengah Utara dan Sektor Tengah Selatan, perpecahan-perpecahan ini berakibat pada diambilnya tindakan keras untuk mencegah disintegrasi. Komisi menerima laporan yang mengatakan bahwa kelompok penduduk yang terpisah dari konsentrasi penduduk yang besar ditangkap dan beberapa atau semua anggotanya dibunuh.

449. Jenis pembunuhan dalam jumlah besar seperti ini yang dilaporkan kepada Komisi adalah pembunuhan massal terhadap 43 warga sipil di Manufahi pada 1978.

* Pernyataan HRVD 2021. Kasus serupa tergambar dalam Pernyataan HRVD 3562 dan 3597.

† Banyak Profil Komunitas Komisi menggambarkan proses ini. Contoh yang mewakili termasuk di antaranya Profil Desa Hoholau, Subdistrik Aileu Kota, Distrik Aileu; Desa Liurai, Subdistrik Turisca, Distrik Manufahi; Desa Baboi Leten, Subdistrik Atsabe, Distrik Ermera; Desa Beidasi dan Aldeia Beco, Subdistrik Fatululik, Distrik Covalima; Desa Defawasi, Subdistrik Baguia, Distrik Baucau; Desa Orlalan, Subdistrik Laclubar, Distrik Manatuto, Aldeia Puno, Desa Pairara, Subdistrik Moro, Distrik Lautém; dan Desa Bibileo, Subdistrik Viqueque, Distrik Viqueque.

Ke-43 orang tersebut adalah sekelompok penduduk sipil yang telah mengungsi di hutan di wilayah Aituha (Alas, Manufahi) untuk menghindari dari pasukan Indonesia yang semakin mendekat. Di Aituha mereka ditahan oleh satu unit Falintil yang dipimpin oleh M272 dan dituduh sebagai pengkhianat. Setelah dipukuli, ke-43 orang tersebut diikat dan dibawa ke Laututo di wilayah Fahinehan (Fatuberliu, Manufahi), tempat mereka dibunuh.⁴⁶²

450. Meskipun pembunuhan di Laututo luarbiasa dalam hal jumlah, ada juga pembunuhan lain dari jenis ini. Pada tahun yang sama di Lacló (Atsabe, Ermera), ketika pasukan Indonesia mengepung wilayah tersebut, satu kelompok berjumlah 10 orang mengungsi ke sebuah daerah terpencil di hutan. Pasukan Falintil datang dan membawa mereka dari tempat persembunyian mereka. Hari berikutnya dua orang dari kelompok tersebut, Pedro dan Celestino, ditembak mati.⁴⁶²

Pembunuhan berhubungan dengan serangan dan serbuan Indonesia

451. Komisi menerima laporan tentang pembunuhan warga sipil oleh Fretilin/Falintil yang terjadi saat ABRI mendekat ke suatu wilayah.

452. Pasukan Falintil dan para pendukungnya dilaporkan membunuh sekitar 37 orang di Koooleu di Desa Lore I ((Lospalos, Lautém) saat pasukan Indonesia maju ke Subdistrik Lospalos pada awal 1976. Angelo Araújo Fernandes, yang kehilangan sembilan anggota keluarganya, menceritakan kepada Komisi:

Pasukan Fretilin bersama yang dipimpin oleh M303, menyuruh saya, ayah saya, dan kedua kakak saya bersama lima orang teman yang lain untuk pergi ke Pasikenu di Desa Souro untuk menemui para pemimpin Fretilin. Kami sembilan orang segera pergi bersama pasukan Fretilin dan Pasukan Tombak ke Pasikenu, tetapi di tengah perjalanan, mereka mengikat tangan kami ke belakang dengan tali yang dalam bahasa Fataluku disebut 'tanu'. Saat kami tiba di Pasikenu, Komandan M303 memerintahkan kami berhenti dan ia pergi untuk memeriksa apakah para pemimpin Fretilin berada di tempat mereka atau tidak. Tak lama kemudian ia kembali dan mengatakan bahwa para pemimpin Fretilin tidak berada di sana. Setelah itu ia memerintahkan anakbuahnya untuk membawa kami ke bawah sebuah pohon dan kemudian

* Pernyataan-pernyataan yang dibuat kepada Komisi menyebut 43 orang berikut sebagai korban dari pembunuhan massal ini: Graciano da Costa, Rui Luis da Costa, Anita da Costa, Agosto da Costa, Adriano da Costa, Inacia da Costa, Francisco da Costa, Costa, Eugenia da Costa, Jaimito da Costa, Leki Berek, Catarina da Costa, Carlos da Costa, Francisco Lorença, Hermenegildo, Castela da Costa, Anibal da Costa, Cristovão da Costa, Domingos Bere-Malik, Sia-lelok, Maria da Costa, Ernesto da Costa, Miguel da Costa, Cai Uka, Bi Malik, Loa Kolik, Sui Mauk, Coli Malik, Bere Leki, Seu Berek, Duarte Mau Seran, Antonio da Costa, Marcos da Costa, Antonio Bere Malik, Bere Colik, Luis, Filipe da Costa, Maria da Costa, Pedro da Costa, Juliana da Costa, Sara Mauk, Bui Leki Bere Leki. Pernyataan-pernyataan juga menyebut para pelaku sebagai berikut: M272, M302, M303, M304, M305, M306, M307, M308, M309, M310, M311, M312, M313, M314. (Pernyataan HRVD 4802 dan 4776)

mengikat setiap dua orang menjadi satu dengan tali yang dalam bahasa Fataluku disebut 'kawaha-waha'.

Saya diikat bersama kakak saya. Kira-kira jam sepuluh pagi mereka mulai menembaki kami dan sebuah peluru mengenai kakak saya. Kami berdua terangkat kurang lebih tiga atau empat meter ke udara lalu kami terjatuh ke dalam jurang, sehingga tali yang mengikat kami terputus. Saya segera melarikan diri dengan tangan terikat ke belakang, sementara teman-temanku termasuk ayah dan dua orang kakak saya tewas seketika di tempat kejadian. Pasukan Fretilin dan Pasukan Tombak terus menembaki saya. Kemudian saya melepaskan sarung yang saya kenakan sehingga [saya] hanya mengenakan celana dalam saja. Saya terus berlari ke dalam sebuah sungai sehingga mereka tidak bisa mengikuti jejak saya. Ternyata mereka kembali dan menembak mati semua sanak keluarga saya yang berjumlah 37 orang di Ko'oleu, desa Lore I, termasuk anak-anak dan perempuan hamil. Saya tidak melihat mereka ditembak, saya hanya mendengar letusan senjata dari arah Ko'oleu, tempat mereka berada.

Selama 24 tahun, saya tetap tidak bisa menemukan keluarga saya. Saya ingin tahu siapa yang mengirim pasukan...untuk membunuh keluarga saya. Mengapa mereka dikirim? Saya tidak mampu memberitahu anak-anak saya, siapa yang membunuh kakek-nenek mereka. Anak saya bertanya kepada saya, "Ayah, mengapa keluarga kita dibunuh?" , saya tidak bisa menjelaskan.⁴⁶³

453. Komisi menerima beberapa laporan tentang kasus-kasus di mana kegagalan serangan Fretilin atas basis-basis Indonesia dan keberhasilan serangan Indonesia atas basis-basis Fretilin dan Falintil disusul dengan penahanan orang-orang yang dituduh terlibat dalam sabotase.

454. Salah satu tuduhan paling serius di antara beberapa kejahatan yang dituduhkan Komite Sentral terhadap Francisco Xavier do Amaral dan pengikut-pengikutnya adalah tuduhan bahwa mereka telah menyabotase kemampuan gerakan Resistansi sebagai kekuatan perang, terutama di wilayah Laclubar, Soibada, Turiscaï, dan Maubisse. Para sekutu Amaral dituduh telah "secara fisik melenyapkan" beberapa komandan, termasuk sang legenda, Leonardo Alves (Ramahana), pada September 1976, dan gagal mengobarkan resistansi terhadap Indonesia ketika mereka menyerang melalui Turiscaï ke Same (Manufahi) Komisi tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan-tuduhan tersebut.[†]

.....
* "A Nossa Vitoria", h. 11 dan 18-19; dan Profil Komunitas CAVR Desa Liurai, Beremeana, Caimauk, dan Manumera, semuanya di Subdistrik Turiscaï, Distrik Manufahi menyebut tanggal masuknya pasukan Indonesia ke Turiscaï pada Maret-April 1976.

† Versi pihak Indonesia tentang kematian Ramahana adalah bahwa ia dibunuh di Funar (Laclubar, Manatuto) pada 23 September 1976 dalam operasi Indonesia dengan partisipasi pasukan Kopassandha dan Batalion Khusus (Tonsus) yang terdiri atas orang-orang Timor yang berbasis di Laclubar (Ken Con-

455. Namun, Komisi menerima laporan tentang pembunuhan di wilayah Soibada (Manatuto), di mana korban adalah prajurit Falintil yang dituduh telah membantu pasukan Indonesia dalam melancarkan serangan yang menewaskan seorang komandan senior.

456. Pada Oktober 1976 pasukan Falintil di bawah komando Antobio Lobato (Calohan, adik bungsu Nicolau Lobato) menuju Lakero, Fatumakerek (Soibada, Manatuto), untuk menyerang pasukan Indonesia yang dipercaya berada di sana. Ketika mereka memasuki desa tersebut, tidak ada tanda-tanda kehadiran pasukan Indonesia, sehingga unit Falintil ini kembali ke basisnya di Au-Abut. Pada malam itu juga pasukan Indonesia menyerang Au-Abut dan Calohan tewas dalam pertempuran.

457. Setelah penyerangan, dua prajurit Falintil, João Nifa dan João Manufahi, ditahan karena dicurigai menyampaikan informasi kepada pasukan Indonesia. Atas perintah *assistente* M261, mereka diikat dan ditempatkan di sebuah kandang bambu dan dibakar dengan besi panas agar mereka bicara. Setelah kemudian Boru Metan (Caicassa, Fatuberliu, Manufahi) diserang oleh Indonesia, dan keduanya dipindahkan bersama tahanan lainnya ke tempat bernama Kian-soru. João Manufahi dibawa kembali ke Au-Abut dan dibunuh oleh pasukan Falintil. Setelah selama dua bulan terus bergerak menghindari dari serangan maju pasukan Indonesia, João Nifa dan tahanan lainnya dibebaskan atas perintah Menteri Kehakiman Kakuk (Eduardo dos Anjos). Setelah pembebasannya, João Nifa mengetahui bahwa ketika ia ditahan, istrinya tidak sanggup mencari makanan yang cukup dan akibatnya kedua anaknya meninggal.⁴⁶⁴

458. Selama pegeboman yang hebat atas Gunung Matebian yang menelan banyak korban jiwa, ada kejadian di mana prajurit-prajurit perorangan disalahkan karena serangan tersebut dan kemudian dibunuh atau menghilang.⁴⁶⁵

459. Hubungan apa saja dengan penduduk di wilayah yang dikuasai Indonesia dapat menimbulkan kecurigaan tentang loyalitas seseorang dan juga bisa berakibat fatal. Pembunuhan atas Alice di Uatolari (Viqueque) pada November 1977, setelah dia diketahui menerima sebuah surat dari keluarganya di kota, telah dijelaskan (lihat paragraf 401). Bahkan kadang-kadang tindakan tanpa sadar dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa korban telah berhubungan dengan Indonesia dan bisa berakibat serius, termasuk kematian korban. Setidak-tidaknya dalam satu kasus, kepemilikan sebuah bola menjadi alasan penahanan dan pembunuhan. Dua guru sekolah, Miguel dos Santos dan Manuel Pereira, dibunuh setelah membawa bola yang mereka temukan dekat basis Fretilin. Pembunuh mereka menjadikan bola sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan kontak dengan ABRI.*

boy, *Kopassus*, h. 268). Sumber yang sama menggambarkan kampanye "surat kaleng" yang dilaksanakan oleh Kopassus pada Desember 1976. Kampanye itu dirancang untuk menebarkan rasa saling tidak percaya di antara para pemimpin gerakan Resistensi, dan, dikatakan bahwa kampanye ini berakibat pada pembunuhan yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil terhadap setidaknya salah seorang komandan (ibid. h. 269-270).

* Pernyataan HRVD 0124 dan 0166 sama-sama menggambarkan pembunuhan di Remexio terhadap seorang yang kedapatan mempunyai bola. Tidak jelas apakah pernyataan ini berhubungan dengan ke-

460. Pada Januari 1976 pasukan ABRI memasuki Dare (Hato Builico, Ainaro) menyebabkan banyak penduduk lari ke hutan. Deponen meminta dua anggota keluarganya, Benjamin dan Bernardo, kembali ke Dare untuk meninjau keadaan dan membuat kontak dengan pastor setempat, Pastor Ricardo. Akan tetapi dalam perjalanan ke Dare, keduanya ditangkap oleh Falintil yang mengira mereka mencoba mengontak militer Indonesia dan keduanya ditembak mati.⁴⁶⁶

461. Sama seperti kasus keluarga Maria Antonia (lihat paragraf 350 di atas), mempunyai keluarga yang bekerjasama dengan Indonesia dapat berakibat fatal. Dalam kasus lainnya yang berakhir dengan pembunuhan di Laclo (Manatuto), yang juga merupakan daerah asal keluarga Maria Antonia, orangtua yang anak laki-lakinya telah direkrut ke dalam Batalion 744 ABRI, diinterogasi karena dicurigai menyampaikan informasi kepada anaknya dan mereka dibunuh.⁴⁶⁷

Pembunuhan warga sipil setelah jatuhnya *bases de apoio*

462. Setelah hancurnya wilayah-wilayah basis besar pada akhir 1978 dan awal 1979 dan menyerahnya sebagian besar penduduk sipil, gerakan Resistansi mulai melakukan proses reorganisasi yang berlangsung perlahan. Meskipun kebijakan Indonesia menempatkan warga sipil dalam permukiman yang dijaga ketat dan membatasi pergerakan mereka, warga sipil di permukiman-permukiman itu berhasil mengatur diri secara diam-diam. Dalam beberapa kasus, para anggota gerakan klandestin yang baru muncul membunuh orang-orang yang mereka tuduh bekerjasama dengan Indonesia.

463. Salah seorang korban pembunuhan jenis ini adalah Alberto Correia, yang aktif dalam gerakan klandestin di Vemasse (Baucau) tetapi kemudian dicurigai menjadi agen bagi intelijen Indonesia. Pada sebuah pertemuan dengan Falintil pada Juni 1979 ia ditembak mati oleh dua prajurit Falintil atas perintah Komandan M304.⁴⁶⁸

464. Di Aubaca, Bucoli (Baucau, Baucau) pada Januari 1979 tiga anggota klandestin membunuh Mario da Costa Ximenes, yang dituduh bekerjasama dengan intelijen ABRI. Salah seorang pemuda memegang Mario, sementara seorang lainnya menikamnya di belakang, mengakibatkan ia terbunuh di tempat itu juga.⁴⁶⁹

465. Falintil membunuh seorang pemimpin setempat yang berkaitan dengan pemerintah Indonesia di Fuat (Iliomar, Lautém) pada 1979. Kepala desa Fuat, Francisco Ferreira, pergi ke kebunnya bersama lima orang lainnya untuk memanen jagung. Pasukan Falintil dipimpin oleh M270 menangkap, mengikat, dan membawa mereka ke tempat di luar Fuat yang disebut Korufira. Mereka diberitahu bahwa mereka dapat saja diizinkan kembali ke desa mereka, tetapi jika mereka melakukan

.....
jadian yang sama atau kejadian yang berbeda. Sangat mungkin kedua pernyataan ini menunjuk kepada kejadian yang berbeda: pernyataan pertama menyebut tanggal kejadian adalah 1976, dan pernyataan kedua menyebut 1977; dalam pernyataan pertama ada satu korban, dalam pernyataan kedua menyebut dua. Dalam sebuah kasus yang lain, juga Sektor Utara Bagian Tengah, seorang laki-laki bernama Gaspar ditangkap pada Maret 1977 dan ditahan di Renal atas perintah M176, setelah ia kembali dari Dili dengan pakaian baru. Namun, Gaspar dibebaskan sebulan kemudian.

hal itu, Francisco Ferreira hanya akan menindas penduduk. Mereka kemudian dibawa ke suatu tempat bernama A'hasan, di mana M270 dan M271 membunuh Francisco Ferreira dan dua laki-laki lainnya.⁴⁷⁰

466. Seorang deponen mengatakan kepada Komisi bahwa setelah menyerahkan diri kepada militer Indonesia pada 1979, ia dan beberapa anggota keluarga diizinkan mencari kakek dan nenek mereka di Bibileo (Viqueque):

Dalam perjalanan ke Bibileo, tepatnya di daerah Fetu Beu, kami bertemu tujuh anggota pasukan Falintil yang dipimpin oleh M236. Komandan M236 menembak nenek saya, Sahe Naha, di bagian dada. Oleh karena ia tidak [segera] meninggal, seorang tentara Falintil bernama M264 memotong lehernya dengan sebuah pedang [surik] hingga kepalanya terpisah dan [ia] meninggal. Saat itu, lima orang anggota keluarga saya yaitu Cai Rubik, Laku Fonok, Napoleão, Noko Labu, Julião, dan Bosi Naha berhasil meloloskan diri. Sedangkan anggota keluarga yang lain diikat satu sama lain dengan tali...Mereka dipaksa berjalan ke sebuah daerah bernama Wemaran. Di sana ikatan mereka dilepaskan dan empat orang saudara perempuan bernama Luru Caik Etalina, Olinda Rangel, Petrolina Rangel, Clementina Gomes diperintahkan menumbuk padi untuk makan...Komandan M236 menginterogasi ayah saya Cai Rubik...ia dicurigai sebagai mata-mata atau penunjuk jalan bagi militer Indonesia. Karena takut, ia mengakui tuduhan mereka. Keesokan harinya mereka beranjak ke Fatu Uani, Bibileo. Di sana mereka bertemu paman (tiu) dan bibi (tia) saya bernama Leki Bosi dan Dasi Labu. Keduanya ditangkap dan ditanyai apakah mereka pernah bertemu ABRI atau memberikan makanan kepada ABRI. Mereka menjawab: "Jika kami bertemu Falintil, kami memberi mereka makanan; hal yang sama kami lakukan untuk ABRI, karena kami masyarakat yang bodoh ini takut mati." Mendengar hal ini, para tentara Falintil memukuli paman dan bibi saya dengan sepotong bambu mentah. Dasi Labu meninggal saat itu juga. Karena Leki Bosi belum meninggal, para tentara Falintil memanggag sepotong besi pada bara api, lalu membakar sekujur tubuhnya. Jenazah bibi saya ditinggalkan begitu saja.⁴⁷¹

Pembunuhan warga sipil yang mencari makanan atau melakukan pekerjaan sehari-hari

467. Banyak pembunuhan oleh Falintil yang digambarkan kepada Komisi terjadi ketika satuan Falintil bertemu warga sipil yang berkeliaran di luar wilayah-wilayah di mana mereka diperbolehkan pergi.⁴⁷² Sangat sering warga sipil yang dibunuh dalam keadaan yang demikian adalah mereka yang tinggal di basis-basis Resistansi, yang karena dipaksa oleh kelaparan, kembali ke kebun mereka atau pergi mencari makanan di wilayah-wilayah yang tidak dikuasai oleh kedua belah

pihak. Dalam hal ini termasuk juga orang-orang yang hidup di bawah kekuasaan Indonesia atau di wilayah-wilayah yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh kedua belah pihak. Secara teknis, siapa pun yang diketahui pergi melewati batas-batas Zona Resistansi dapat dicurigai menghubungi musuh.⁴⁷³ Pembunuhan semacam ini dilaporkan kepada Komisi terjadi secara tetap dalam situasi yang beragam di seluruh wilayah Timor-Leste antara 1976 dan 1979.

468. Selama periode ini baik ABRI maupun Falintil telah membunuh warga sipil yang tertangkap di wilayah-wilayah yang tidak mereka kuasai, dan hampir semua pembunuhan itu tampaknya didasari oleh kecurigaan bahwa warga sipil bekerja untuk pihak lawan.⁴⁷⁴ Namun, dari sisi Fretilin keinginan untuk mencegah pelanggaran disiplin secara umum dan untuk membendung arus penyerahan diri juga merupakan faktor penting, khususnya pada tahun-tahun terakhir periode ini. Pada akhir 1977, Komite Sentral Fretilin mengeluarkan larangan resmi tentang kebebasan bergerak sebagai tanggapan terhadap tekanan yang semakin meningkat dari militer Indonesia, meningkatnya jumlah mereka yang menyerahkan diri secara diam-diam di tengah meluasnya kelaparan, dan perpecahan yang semakin meluas di antara para pemimpin menyangkut hak rakyat untuk menyerah.⁴⁷⁵ Sejumlah besar kasus dilaporkan kepada Komisi terjadi dalam 1977-78.

469. Sebuah kasus awal pembunuhan oleh Fretilin terhadap warga sipil yang pergi mencari makan terjadi di Gunung Matebian pada 1976. Feliciano da Costa dan keluarganya telah dievakuasi Fretilin ke Gunung Matebian karena ABRI mendekati wilayah tempat mereka menetap. Namun hidup begitu sulit sehingga empat anggota keluarganya meninggal karena kelaparan. Dua anggota keluarga yang lain, Naha Saba dan Luis Lequi, memutuskan pergi bersama seorang teman bernama Augusto untuk mencari makanan di wilayah Salaek-Lequeissi (Ossu, Viqueque). Para prajurit Falintil menemukan dan menangkap Naha Saba dan Luis Lequi dan membawa mereka ke markas Falintil tempat mereka dibunuh. Setelah pembunuhan itu, Feliciano da Costa dan saudara perempuan Augusto, yang telah melarikan diri, mengalami penyiksaan dan interogasi dari para pemimpin Fretilin dan para komandan Falintil di markas Zona 16 Agustus. Secara khusus mereka ditanyai mengenai kesetiaan ketiga orang tersebut kepada tujuan gerakan kemerdekaan.⁴⁷⁶

470. Pada 1977 banyak orang dari *aldeia* Puno, Pairara (Moro, Lautém) hampir meninggal karena kelaparan di wilayah tempat Fretilin telah mengevakuasi mereka. Tanpa putus asa beberapa orang pergi mengumpulkan makanan di kebun-kebun mereka di Sikai. Saat mereka kembali, lima orang di antara mereka ditangkap, dua orang ditembak mati atas perintah *delegado* Fretilin.⁴⁷⁷

471. Pada 1978, di wilayah Remexio (Aileu), karena tidak mempunyai makanan, sekelompok orang termasuk Bastião da Silva pergi mencari makanan di wilayah Lismori. Saat mereka kembali ke *base*, pasukan Falintil menangkap dan menaruh mereka dalam Renal. Beberapa waktu kemudian, semuanya dibebaskan dari Renal kecuali Bastião da Silva. Ia terus ditahan karena dicurigai telah mempunyai hubungan dengan ABRI dan akhirnya ia meninggal karena sakit di Renal.⁴⁷⁸

472. Orang-orang yang tinggal di wilayah yang dikuasai Indonesia yang pergi untuk bekerja di kebun mereka juga dalam bahaya.* Sebagai contoh, tiga warga sipil ditembak mati pada 1977 oleh Falintil saat mereka memanen jagung di wilayah bernama Betano, Manufahi, tempat Falintil berada:

Pada bulan Maret 1977, tiga kakak perempuan saya—Seubere [15 tahun], Cotu-Bau [15 tahun] dan Edumau [16 tahun]...pergi ke kebun kami di Aidere, Bemetan [Betano, Manufahi] untuk memanen jagung. Tiba-tiba para anggota Falintil mengepung mereka di kebun jagung itu. Kakak saya, Seubere, ditembak mati di tempat. Dua kakak perempuan saya yang masih hidup, Cotu-Bau dan Edumau, menangis dan berteriak sehingga anggota Falintil datang dan menangkap mereka di kebun itu. Mereka dibawa oleh Falintil ke lokasi lain di Aidere. Di sana mereka ditembak mati oleh Falintil. Setelah mereka mati, keduanya ditelanjangi.⁴⁷⁹

473. Beberapa dari kasus ini dilaporkan terjadi setelah jatuhnya *base de apoio*. Sebagaimana pembunuhan kepala desa Fuat (Iliomar, Lautém) yang disebutkan di paragraf 446 di atas, korban dari beberapa kasus ini dapat saja diincar sebagai kolaborator. Dalam sebuah kejadian, pada 25 Oktober 1979 di Mariasa di Desa Uairoke (Luro, Lautém), Thomás Pinto dan dua adik laki-laknya sedang mengumpulkan umbi-umbian untuk dimakan saat mereka ditangkap oleh sekelompok Falintil berjumlah delapan orang. Kelompok Falintil ini menuduh mereka bekerja untuk ABRI. Mereka diikat dan tidak lama kemudian dibebaskan dan diperintahkan menggali lubang yang dangkal. Lalu mereka diikat lagi dan ketiganya ditembak. Thomás berhasil melarikan diri, tetapi kedua saudaranya meninggal.⁴⁸⁰

474. Walaupun demikian, dari informasi yang tersedia, sering sulit untuk menentukan alasan pembunuhan. Sebagai contoh, pada 1979 Francisco Cardoso dan saudaranya Antonio Tai pergi ke Omelai Guda di Lolotoe (Bobonaro, Bobonaro) untuk mencari makan. Di sana mereka ditangkap oleh Falintil, yang membawa mereka ke Sungai Tapa dan menembaki mereka. Francisco Cardoso meninggal, tetapi Antonio Tai selamat.⁴⁸¹

475. Dalam sebuah kasus, kedua orangtua seorang deponen terbunuh dalam dua kejadian yang berbeda, saat mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sang ayah, Ricardo Freitas, yang digambarkan sebagai anggota masyarakat biasa, ditembak mati pada 17 Juni 1977 di pantai di Desa Lautém (Moro, Lautém) di hadapan istrinya, Felicidade de Xavier, saat ia akan melaut mencari ikan. Dua tahun kemudian, pada Agustus 1979, Felicidade dan seorang temannya keluar mencari umbi-umbian di sekitar *aldeia* Solerasi (Maina I, Moro, Lautém) saat mereka bertemu patroli Falintil. Felicidade ditangkap dan ditembak mati dua hari kemudian.⁴⁸²

* Sebagai contoh selain yang ter kutip dalam teks, lihat juga Pernyataan HRVD 1711, 3027, 5567 (Bobonaro 1979), 6490 (Carlilo, Manatuto, Juli 1976)

476. Pembunuhan terhadap orang-orang yang bekerja di kebun mereka kadang-kadang dihubungkan dengan perampokan. Mengingat kembali sebuah kasus di mana para prajurit Falintil membunuh warga sipil yang mengumpulkan makanan, Marta Ximenes di Lautém mengatakan kepada Komisi:

Pada tanggal 17 Agustus 1979, sekitar pukul 6 sore, saya [Marta Ximenes], suami saya Luis Lopes, dan kedua anak kami, Cicilio Lopes dan Oktavio Lopes sedang berada di kebun [kami] di Paitaal, Bauro. Tiba-tiba tiga orang [anggota] Falintil, salah seorang di antara mereka bernama Gil, muncul dan menanyakan [kepada] Luis surat perjalanan kami. Saat itu saya ada dalam gubuk yang ada di kebun, sedangkan Cicilio dan Oktavio [sedang] bersama ayah mereka. Ia [Luis] memberikan surat jalan kami kepada Gil, tetapi ia [Gil] merobek surat itu dan menembak ke arah Luis namun peluru tidak mengenai Luis. Akhirnya mereka mengambil linggis dan menikamkan pada dada Luis...Luis memanggil nama saya, "Marta." Saya menoleh keluar gubuk untuk melihatnya. Ia berkata, "sekarang saya mati, jaga baik-baik anak-anak". Selesai ia berkata demikian, mereka menembaki gubuk yang saya tempati. Sebuah peluru mengenai kaki kiri saya dan saya jatuh. Setelah itu, [anggota] Falintil masuk kebun dan mengambil semua jagung dan ubi kayu kami.⁴⁸³

Pembunuhan berhubungan dengan pelanggaran disiplin

477. Komisi juga menerima kesaksian tentang pembunuhan terhadap prajurit-prajurit Falintil yang menolak melaksanakan perintah⁴⁸⁴ dan yang dituduh mencuri.⁴⁸⁵

478. Pada Maret 1978, di Laclubar (Manatuto), Maukaho dan Abrão ditangkap oleh M308 karena mencuri jagung milik M308. Lima orang pasukan Fretilin membawa kedua orang itu ke markas Zona Kalohan. Di sana mereka diikat dan ditelanjangi. Kemudian *adjunto* M309 mengumumkan kepada orang-orang di Zona Kalohan bahwa keesokan harinya dua ekor kerbau akan disembelih untuk sebuah pesta. Keesokan harinya bukan kerbau yang disembelih melainkan kedua orang itu yang dibunuh.⁴⁸⁶

Pembunuhan lainnya

479. Beberapa pembunuhan yang dilaporkan kepada Komisi tidak dapat dimasukkan dalam kategori-kategori di atas. Sebagai contoh, Komisi menerima pernyataan-pernyataan yang menggambarkan beberapa kejadian yang terjadi pada 1976 dan 1979 di Subdistrik Natarbora dan Soibada di Manatuto, di mana para anggota Fretilin dilaporkan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai santet (*buan, swanggi*).⁴⁸⁷ Tidak jelas dari pernyataan-pernyataan ini apakah pembunuhan-pembunuhan ini mendapat dukungan institusional dari Fretilin. Namun, setidaknya-tidaknya ada satu kejadian di mana Komite Sentral dilaporkan melarang sebuah gerakan pemujaan

yang disebut Siloko Nailoko yang telah mendapat dukungan di wilayah-wilayah yang dikuasai Fretilin di Region Tengah pada tahun 1977. Para pendukung gerakan ini dilaporkan ditangkap dan beberapa di antaranya dilaporkan dibunuh.⁴⁸⁸

480. Beberapa kasus yang lain tak dapat dikategorisasikan. Salah satunya adalah kasus Alarico Tilmán dari Same (Manufahi) yang mempunyai kebiasaan keluar dari rumah pada malam hari pada saat tertidur. Suatu malam pada 1978 ia berjalan dalam keadaan tertidur ke dalam hutan menuju sebuah pos Falintil. Pasukan Falintil menangkap dan membunuhnya.⁴⁸⁹

Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh ABRI/TNI pada 1980-1984

481. Pada awal dekade 1980-an pasukan Resistansi mulai menyatukan kembali kekuatan di pedalaman dan menyerang pos-pos militer Indonesia yang rentan, sebagai bagian dari strategi melakukan perang gerilya sambil memobilisasi jaringan klandestin di pusat-pusat permukiman untuk memberikan dukungan material dan intelijen.⁴⁹⁰ Militer Indonesia membalas dengan menyerang tidak hanya pejuang Resistansi, tetapi juga penduduk sipil di seluruh wilayah ini, dan dengan membidik petempur serta anggota klandestin yang bukan petempur. Analisa data yang dikumpulkan Komisi menunjukkan kenaikan pembunuhan tidak sah dan penghilangan antara 1982 dan 1984, yang memuncak pada 1983. Beberapa kesaksian yang masuk ke Komisi menunjukkan bahwa kenaikan jumlah eksekusi pada awal dekade 1980-an jelas ditujukan sebagai balasan atas serangan tertentu Falintil.

482. Dari 1980 sampai 1984 Resistansi bersenjata terus memperkuat diri dan menyerang pos-pos militer Indonesia yang rentan di seluruh wilayah ini. Serangan Falintil Distrik Dili, Ainaro, Covalima, Viqueque, dan Lautém menyebabkan kematian tentara Indonesia. Militer Indonesia membalas secara membabi buta dengan sasaran petempur maupun penduduk sipil. Setelah gencatan senjata Maret-Agustus 1983 gagal, komandan yang baru diangkat sebagai Panglima ABRI, Jenderal Benny Moerdani, mengumumkan bahwa militer Indonesia melancarkan operasi baru, Operasi Persatuan, dan bahwa “kali ini tidak main-main.”⁴⁹¹

Pembunuhan dan penghilangan setelah serangan pihak Resistansi di Dili pada 10 Juni 1980

483. Pada malam 10 Juni pasukan Falintil dari Sektor Perbatasan Utara dan Tengah Selatan serta anggota jaringan klandestin di Dili melancarkan serangan ke pos Indonesia di stasiun pemancar di Marabia dekat Dare dan merampas persenjataan Kompi B Batalion 744 di Becora di timur Dili. Dalam serangan ke Marabia beberapa

.....
* Menurut beberapa sumber, pada 10 Juni ada juga serangan ke pos ABRI di Dare dan Lahane [Pernyataan HRVD 06983]. Komisi tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan tentang serangan ini. Tidak jelas, misalnya, unsur Resistansi mana di Dili dan distrik sekitarnya yang menjadi kekuatan penggerak dalam

tentara Indonesia terbunuh.⁴⁹² Setelah serangan ini ratusan penduduk ditangkap dalam operasi besar-besaran yang melibatkan seluruh aparat keamanan di Dili, termasuk unit-unit struktur teritorial (Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa), Batalion 744 yang berbasis di Dili, Kopassandha, dan Hansip.

484. Di antara orang-orang yang ditangkap adalah komandan dan pasukan Falintil serta orang-orang lain yang secara langsung terlibat serangan, mereka yang aktif dalam jaringan klandestin, dan banyak penduduk yang menurut penilaian pasukan keamanan Indonesia merupakan simpatisan gerakan prokemerdekaan. Komisi menerima nama 121 orang yang terbunuh, hilang, atau meninggal dalam tahanan akibat penyiksaan atau ditelantarkan pada minggu-minggu setelah 10 Juni. Kebanyakan korban meninggal di Dili. Namun demikian, Komisi juga menerima informasi tentang pembunuhan atau penghilangan orang-orang di distrik Aileu, Manufahi, dan Manatuto di luar Dili, yang ditangkap setelah melarikan diri dari Dili setelah serangan atau yang dicurigai sebagai anggota jaringan klandestin yang berperan dalam perencanaan serangan. Serangan mempunyai dampak yang besar terhadap penduduk pada umumnya, tetapi khususnya penduduk sipil yang tinggal di daerah-daerah dekat tempat yang diserang. Ratusan orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak yang sendirian, dikirim ke Ataúro.⁴⁹³ Militer Indonesia memperketat situasi keamanan yang sudah ketat: setelah serangan, ABRI menginterogasi perempuan dan anak-anak dan meningkatkan frekuensi tugas jaga malam wajib.⁴⁹⁴ Beberapa komunitas di Dili Timur mengalami pemindahan paksa dan dibebaskan belum lama ini.*

.....
memutuskan untuk memajukan tanggal serangan ke 10 Juni saat serangan ini terjadi bersamaan dengan kunjungan delegasi kongres Amerika (yang sebenarnya tidak pernah dijadwalkan). Unsur gerakan klandestin terlibat banyak dalam serangan, tetapi tidak jelas apakah mereka mendapat dukungan penuh dari gerakan ini. Menurut Xanana Gusmão, keputusan untuk melancarkan serangan pada tanggal 10 Juni diambil oleh sekelompok komandan Falintil meskipun ditentang oleh organisasi klandestin di Dili. Xanana Gusmão, yang secara prinsip menyetujui serangan ini dan yang pasukannya sendiri bergerak ke Dili dari timur saat serangan terjadi, bersikap kritis mengenai keputusan untuk memajukan tanggal serangan. Dia menggambarkan episode ini sebagai salah satu "pengalaman pahit" (*amargas experiências*) perang di mana tujuan utama rencana ini—merampas senjata dan amunisi—dikorbankan untuk tujuan yang kurang penting seperti menarik perhatian internasional. Juga tidak jelas seberapa banyak dukungan pasukan Falintil, terutama mereka dari Sektor Perbatasan Utara. [Menurut pandangan Xanana Gusmão tentang 10 Juni, lihat "Companheiro Terus", *Timor Leste – Um Povo, Uma Pátria*, hal. 129-132; dan Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004. Sumber lain yang memberi penjelasan mengenai kejadian pada 10 Juni termasuk Neil Barrett, Wawancara dengan David Ximenes; Wawancara CAVR dengan Bernardino Villanova; Pernyataan HRVD 05655 dan 06983 dan Profil Komunitas CAVR, Desa Nazare, Sub-distrik Dom Aleixo, Distrik Dili, dan Desa Bairro Alto dan Alto Hospital, Vera Cruz, Mascarenhas, Distrik Dili].

* Penduduk yang tinggal di pinggir Balibar (Cristo Rei, Dili Timur) dan Ailok (Becora, Cristo Rei, Dili Timur) terpusat di Fatu-Loda di Balibar di mana mereka terpaksa tinggal sampai 1986 di bawah pengawasan ketat yang menyebabkan banyak meninggal. Mereka harus lapor ke Babinsa apabila mereka ingin meninggalkan wilayah tersebut dan tidak boleh meninggalkan wilayah in sama sekali antara 4.00 sore dan 8.00 pagi [Profil Komunitas CAVR, Balibar/Ailok, Becora, Subdistrik Cristo Rei, Dili Timur]. Sesaat setelah serangan Hansip membakar rumah-rumah di Suhu-Rama dan memaksa penduduk dari sana pindah ke Santa Cruz [Pernyataan HRVD 08037]. Kondisi yang mirip dalam beberapa hal dengan yang dilaporkan di Balibar/Ailok Profil Komunitas CAVR juga melaporkan dalam Profil Komunitas CAVR, Florestal/Laulara dan 10 RT de Junho/Nahaek, Sub-distrik Vera Cruz, Dili Barat].

485. Setelah serangan, pasukan keamanan tanpa pandang bulu mengumpulkan orang yang mempunyai kaitan dengan Resistansi. Di Becora dan Culuhun, dua daerah yang dijadikan sasaran pembersihan, orang-orang yang oleh ABRI sudah “dicatat” saat mereka menyerah, ditangkap secara massal.⁴⁹⁵ Mereka yang hilang atau dieksekusi berasal dari berbagai latar belakang, dari mantan anggota Komite Sentral Fretilin sampai anak-anak.

Tabel 18: Orang-orang yang dilaporkan telah dibunuh atau “dihilangkan” setelah serangan 10 Juni

| Nama | Tempat lahir | Tempat tinggal | Jabatan | Tanggal penangkapan | Informasi lainnya |
|--------------------|--------------|----------------|---|---|---|
| Abilio Loli Rai | Manatuto | Manatuto | | 7/1/1980 | Ditangkap di Manatuto; hilang pada malam 8 Agustus 1980 |
| Adão Mendonça | Aileu | Dili | Mantan Sekretaris Distrik Fretilin, Aileu; <i>assistente</i> dan komandan | 01/06/1980 (PL); ditangkap pada 12 Juni oleh empat orang tentara dari Koramil Becora di rumah di Lahane Barat, dibawa ke Kodim (Wawancara CAVR dengan Maria de Fatima Martins, Aileu, tt) | Hilang di Comarca; dibawa ke Kodim pada 12 Juni (03217) |
| Adriano dos Santos | Tutuala | Dili | | 11/06/1980 (HRVD) | Hilang di Comarca (PL); hilang dari markas Kopassandha Colmera (HRVD) |
| Adriano Mesquita | Dili | Dare | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca; dikonfirmasi dalam 00072 |
| Afonso Moniz | Dili | Santa Cruz | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca: Hilang dari Comarca beberapa waktu setelah 18 Juni dengan Augusto, Tomas, Mau Quinta, Camilo, Pedro Lemos dan Augusto (8063) |
| Agostinho Cabral | | | | | hilang |
| Agosto Sousa | Dili | Balibar | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca; Hilang dari Comarca beberapa waktu setelah 18 Juni dengan Augusto, Tomas, Mau Quinta, Camilo, Pedro Lemos dan Augusto (8063) |
| Agustinho | Dili | Dare | | 7/1/1980 | Dibunuh oleh Hansip di Dare |

| | | | | | |
|--------------------------|------|------------------|--------------------|-----------|--|
| Agustinho Soares Laca | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditangkap oleh Btn 121 setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu. |
| Alberto Monteiro | Dili | Lacoto | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Anastacio Sarmento | Dili | Dare | | 7/1/1980 | Dibunuh oleh Hansip di Dare; dibunuh di Perkuburan Dare oleh tiga Hansip, Venancio, Janeiro dan Jorge, pada 11 Juni setelah ditangkap di rumah pada malam sebelumnya |
| Angelina Soares | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditangkap oleh Btn 121 setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu. |
| Antonio | Ossu | Dili/Bautu | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca; kemungkinan Emilio Antonio dalam HRVD 8108 |
| Antonio de Carvalho | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditangkap oleh Btn 121 setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu. |
| Antonio da Cunha | | Ailili, Manatuto | "Ketua Klandestin" | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditangkap oleh Btn 121 setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu. |
| Antonio Leki Mali | | Lacoto | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Antonio Soares Mau Lalan | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditangkap oleh Btn 121 setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu. |
| Asubere | | | | | Hilang dari Comarca (0072) |
| Bere Loek | | | | | Dilaporkan dibunuh oleh Btn 744 |
| Bere Mali | | | | | Dilaporkan dibunuh oleh Btn 744 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------|---|
| Bere Mali Soares | | | | | Dilaporkan dibunuh oleh Btn 744 |
| Caetano | Quelicai | Dili | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Camilo | | | | | Hilang dari Comarca beberapa saat setelah 18 Juni bersama Afonso Moniz, Tomas, Mau Quinta, Pedro Lemos dan Augusto (8063) |
| Carlos de Araújo | Dili/ Madaneno | Madaheno | | 6/1/1980 | Meninggal di Comarca karena pemukulan dan kelaparan |
| Celestino Maubere | Aileu | Besilau, Aileu | | 8/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Da Holo | Dili | Lacoto | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca; ditangkap pada 14 Juni oleh dua prajurit dari Btn 744 dan enam orang TNI lainnya: Joaquim RT, Antonio Bernadino, Paulo Hansip, Joao Hansip, Amandio da Silva Carvalho dan Joao Lacoto, dan dibawa ke pos Balibar. Mereka disiksa dari pagi sampai pukul 13.00. Daholo meninggal di bawah penyiksaan (HRVD 6983). |
| Danilo Coelho | | | | | Hilang dari Comarca |
| Danilo da Silva | Ossu | Dili | | 6/1/1980 | Hilang di Korem |
| Dau Molik Inan | Dili | Dare | | 7/1/1980 | Dibunuh oleh Hansip di Dare |
| Domingos | | | | 6/1/1980 | Hilang dari Kodim Aileu |
| Domingos | Manatuto | Manatuto | | 6/1/1980 | Meninggal di Comarca karena pemukulan dan kelaparan |
| Domingos Borromeu | Same | Dili | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Domingos Caldeira | Turiscaí | Dili | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Domingos Castro | | | | | Hilang setelah ditangkap di Toko Baru, Culuhun; dilaporkan dibunuh oleh Btn 744 bersama tujuh orang lainnya |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|--|-----------|--|
| Domingos Fatima (Mau Nugo Aman) | Dare/Dili | Tiluri | | 6/1/1980 | Hilang di Korem |
| Domingos Mau Nuca | Dili | Hospital | | 6/1/1980 | Hilang dari rumahnya |
| Domingos Soares | | Culuhun | | 6/12/1980 | Hilang setelah ditangkap di Toko Baru, Culuhun; 6955: dilaporkan dibunuh oleh Btn 744 bersama tujuh orang lainnya (Gaspar da Costa, Gaspar, Bere Mali, Bere Mali Soares, Bere Loek, Maurais dan Vidal Soares) dan jenazah mereka dibuang di Fatu Bangku. |
| Domingos Soares (Coli Lac) | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditangkap oleh Btn 121 setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu. |
| Domingos Soares Bac | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditangkap oleh Btn 121 setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu. |
| Edmundo | Ossu | Dili/Bautu | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Eduardo Freitas | Quelicaí | Dili | | 6/1/1980 | Meninggal di Comarca karena pemukulan dan kelaparan |
| Elias Alves | | | | | Hilang dari Comarca |
| Francisco | Dili | Lacoto | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Francisco Araújo | Atsabe | Atsabe | | 6/2/1905 | Ditangkap di Atsabe; dibawa ke Dili; hilang |
| Francisco Gusmão | | | | | Ditangkap di Atsabe; dibawa ke Dili; hilang |
| Francisco Soares Laco | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu |
| Francisco Soares Luli | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------|--|-----------|---|
| Francisco Soares Mean | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu |
| Gaspar | | | | | |
| Gaspar Araújo | | | | | |
| Gaspar Carvalho | | | | | |
| Gaspar José Soares Guterres | | | | | |
| Guilherme | Balibar | Dili/Bidau | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Hermenegildo | Same | Dili | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Isabel Soares | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu |
| Jeronimo | | | | | Hilang dari Comarca |
| Joanico Soares | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu |
| João Batista | | | | 6/1/1980 | Dibawa ke Koramil Comoro dan hilang |
| João Barreto | Dili | Vila Verde | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| João Bosco | | | | 6/11/1980 | Hilang dari Comarca pada 13 Juni dibawa oleh Kapten Mustari dari Intel (5666) |
| João Cristo Rei | Manatuto | Dili | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| João da Costa | Dili | Lacoto | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| João Exposto | Dili | Balibar | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca; dilukai oleh tentara dari Btn 744 pada 10 Juni, diserahkan oleh Dom Martinho ke Comarca pada 19 Juni, dan lalu hilang (4864) |
| João Mau Duan | Dili | Lacoto | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca; |

| | | | | | |
|-------------------|----------|------------------|--------------------|-----------|--|
| Joaquim Assis | | | | | Disebut dalam Profil Komunitas Hera, Cristo Rei sebagai yang dibunuh bersama Mario do Carmo dan Joaquim Soares; ketiganya mantan komandan Falintil |
| Joaquim Soares | | | | | Disebut dalam Profil Komunitas Hera, Cristo Rei sebagai yang dibunuh bersama Mario do Carmo dan Joaquim Assis; ketiganya mantan komandan Falintil |
| Jordão Fernandes | Dili | Lahane | | 6/1/1980 | Hilang di Korem; dikonfirmasi sebagai Mes Korem dalam 0072, tetapi dikatakan ia dicekik di depan tahanan lainnya pada 20 Juni; 0076-5: Jordao dan Mau Meta Luis dibunuh di Mes Korem dengan kepala mereka dibenamkan ke dalam air sampai mereka meninggal suatu waktu antara penangkapan deponen pada 10 Juli dan pemindahannya ke Comarca pada 19 Juli. |
| José | Remexio | Remexio | | 8/17/1980 | Meninggal di Comarca karena pemukulan dan kelaparan |
| José da Sousa | Laleia | Dili | | 7/1/1980 | Hilang 8 Agustus |
| José Manuel | Dili | Dare | | 7/1/1980 | Dibunuh oleh Hansip di Dare |
| José Ramos Soares | | Ailili, Manatuto | "ketua klandestin" | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditangkap oleh Btn 121 setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu. |
| Leão Macedo | Dili | Lacoto | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Lino | Dili | Lacoto | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Luan Berek | Fatumean | Dili | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca; 0076-5: Beberapa tahanan yang dibawa dari Comarca dan hilang, di antaranya Luan Berek, Danilo Coelho dan Elias Alves. |

| | | | | | |
|-------------------|----------|---------------------|--|-----------|--|
| Luciano Soares | Manatuto | Dili | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Malaquias Alves | Dili | Bibi Ruak | | 6/1/1980 | Meninggal di Comarca karena pemukulan dan kelaparan |
| Mali Mau | Lequidoe | Fahisoi | | 8/17/1980 | Meninggal di Comarca karena pemukulan dan kelaparan |
| Manuel | Dili | Ramelau/ Dare | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Marcos Soares | Dili | Dare | | 6/13/1980 | Disiksa di Korem; ditikam di sekujur tubuhnya; hilang; kemungkinan dibunuh di Balibar |
| Maria Barreto | Dare | Dare | | 7/1/1980 | Dibunuh oleh Hansip di Dare |
| Maria Teresa | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditangkap oleh Btn 121 setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu. |
| Mariano Soares | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditangkap oleh Btn 121 setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu. |
| Mário do Carmo | | Hera | | | Disebut dalam Profil Komunitas Hera, Cristo Rei sebagai yang dibunuh bersama Mario do Carmo dan Joaquim Soares; ketiganya mantan komandan Falintil |
| Martinho Saldanha | Dili | Lacoto | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca; Suco Nazare, Dom Aleixo menurut Profil Komunitas |
| Mateus da Costa | | | | | Hilang bersama empat orang lainnya setelah ditangkap di Dulaco, Fatuberliu (Manufahi) |
| Mateus Saldanha | Dili | Lacoto | | 6/1/1980 | Hilang dari Korem |
| Mateus Soares | Dili | Balibar | | 6/14/1980 | Hilang setelah ditangkap di Balibar oleh Btn 744. |

| | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|--|-----------|--|
| Mau Buti | Dili | Marabia | | 6/11/1980 | Hilang di Comarca; disebut sebagai RT di Suhurama, Inur Fuik, Profil Komunitas Nain Feto |
| Mau Leki | Lequidoe | Fahisoi | | 8/17/1980 | Meninggal di Aileu karena pemukulan dan kelaparan |
| Mau Mali | Lequidoe | Fahisoi | | 8/17/1980 | Meninggal di Comarca karena pemukulan dan kelaparan |
| Mau Malik Metan | Dili | Lacoto | | 8/17/1980 | Meninggal di Korem karena pemukulan dan kelaparan |
| Mau Quinta (Resta Parte) | | | | | Hilang dari Comarca |
| Mau Ranek | Dili | Dare | | 7/1/1980 | Dibunuh oleh Hansip di Dare |
| Mau Siri | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditangkap oleh Btn 121 setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu. |
| Maubere | Aileu | Besilau, Aileu | | 8/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Mausabu | | | | | Hilang dari Kodim Aileu setelah ditangkap di Rairema, Aileu |
| Moises | | | | | Hilang bersama empat orang lainnya setelah ditangkap di Dulaco, Faturberliu (Manufahi). |
| Morais | | | | | Hilang setelah ditangkap oleh Btn 744 di Ailo'ok (Balibar) |
| Norberto Fernandes | Dili | Dare | | 6/10/1980 | Ditikam sampai mati oleh Hansip |
| Paulo Xavier | Dili | Lahane | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Pedro Gusmão | | | | | Hilang setelah ditangkap di Dulaco, Faturberliu (Manufahi) |
| Pedro Lemos | Ermera | Ermera | | 6/14/1980 | Ditangkap di Ermera; Hilang dari Comarca pada malam 8 Agustus 1980 |
| Pedro Manek | Dili | Dili | | 8/1/1980 | Hilang di Korem |

| | | | | | |
|--|----------|--------------------|--|-----------|--|
| Raimundo Fatima | Dili | Dare | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Romaldo | Lequidoe | Fahisoi | | 8/17/1980 | Meninggal di Comarca karena pemukulan dan kelaparan |
| Romão Nunes | Dili | Lahane | | 6/1/1980 | Hilang di Korem |
| Rosalino Bonaparte Soares | Manatuto | Santana/ Dili | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Salvador da Rosa de Fatima (Salvador Fatima do Rego) | Tibar | Tibar | | 6/2/1905 | Gerilyawan tertangkap di Tibar; dilaporkan dipukuli sampai mati di Comarca |
| Sancho | Venilale | Dili | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Sanchos Lasikona | | Quintal Boot, Dili | | 7/12/1980 | Hilang setelah ditangkap oleh polisi dan ABRI di rumah di Quintal Boot |
| Sertorio Marques Soares | | Ailili, Manatuto | | 6/28/1980 | Hilang bersama 16 lainnya setelah ditangkap oleh Btn 121 setelah ditahan di Btn 121 Kotis (bekas Hotel Askeu) di Kota Manatuto selama tiga minggu. |
| Silverio dos Santos | | Dili | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Sismundo | Ossu | Dili/Bautu | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Tiago Loi Sara | Dili | Santa Cruz | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Tito | Ossu | Dili | | 6/1/1980 | Hilang dari Comarca |
| Tomás | Aileu | Besilau, Aileu | | 6/1/1980 | Hilang dari Comarca |
| Tomás | | | | | Dilaporkan dibunuh |
| Tomás Soares | Dili | Dare | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Tomás Tilman | Dili | Lacoto | | 6/1/1980 | Hilang di Comarca |
| Venancio Gomes (Mau Seran) | Tibar | Dili | | 6/1/1980 | Dilaporkan diambil dari rumahnya ke Remexio di mana ia dibunuh. |
| Vidal Soares | | Culuhun | | 6/12/1980 | Hilang setelah ditangkap di Toko Baru, Culuhun oleh Btn 744 |

Sumber: Pernyataan HRVD 3217, 3809, 1626, 8063, 6961, 0072, 0076, 6959, 5738, 5020, 5666, 4864, 8063, dan 1439; Wawancara Neil Barret dengan Maria Imaculada Araújo, Dili [tt]; Wawancara CAVR dengan Maria Fatima Martins, Selo Malere (Aileu), t.t.; *En Nome de Presos de 10 June 1980, CRRN Communiqué*, 13 Juli 1983; Profil Komunitas Suhurama, Inur Fuik (Nain Feto, Dili) dan Balibar/Ailok (Dili).

486. Venâncio Gomes da Silva (Mau Seran), mantan anggota Komite Sentral Fretilin yang ditangkap dan ditahan di Dili pada Desember 1975, dilaporkan dibawa dari rumahnya dekat pasar Comoro pada 15 Juni oleh anggota Apodeti bernama M281 dan dibawa ke markas Kodim Dili dengan taksi yang dikendarai oleh M282. Malam itu dia dibawa dengan helikopter ke Remexio dan ditembak mati oleh anggota Koramil setempat bernama M283. Menurut seorang TBO yang menyaksikan eksekusi, mayatnya ditinggal tergeletak di tanah dan dimakan anjing.⁴⁹⁶

487. Pedro Lemos (Teki), mantan komandan Falintil di Sektor Perbatasan Utara, ditangkap di Ermera pada 14 Juni 1980 dan dibawa ke Dili. Dia tampaknya ditahan di Kodim Dili sebelum dipindah ke Mes Korem dan kemudian ke Comarca (Balide). Suatu malam, mungkin 8 Agustus, dia dibawa dari Comarca dan lenyap. Menurut beberapa kesaksian, beberapa orang lain, termasuk Asubere, Jeronimo, Thomás, Afonso Moniz, Augusto, Mauquinta, Camilo, dan Adriano Mesquita, lenyap pada saat yang sama.⁴⁹⁷ Pada bulan sebelum serangan terjadi, seperti juga Adão Mendonça (lihat paragraf 488 di bawah), Pedro Lemos berada di Liquiça menghadiri kursus indoktrinasi ABRI bagi mantan pemimpin dan komandan Fretilin/Falintil, yang tampaknya berakhir setelah serangan 10 Juni.⁴⁹⁸

488. Adão Mendonça, mantan Sekretaris Fretilin untuk Distrik Aileu (lihat Tabel 18: Orang-orang yang dilaporkan telah dibunuh atau “dihilangkan” setelah serangan 10 Juni, setelah paragraf 485, di atas), ditangkap di rumahnya di Lahane (Timur Dili) oleh empat tentara dari Koramil Becora dan dibawa ke Kodim Dili. Dia tidak pernah kembali.⁴⁹⁹

489. Empat mantan komandan Falintil—Joaquim Soares, Mário do Carmo, Bernardo Soares, dan Joaquim Assis—yang dilaporkan menyerah pada September 1979, ditangkap di Hera dan diberitahu bahwa mereka akan mengikuti kursus pertukangan kayu di kantor camat. Hanya satu dari mereka, Bernardo Soares, yang pulang.⁵⁰⁰

490. Adriano dos Santos baru saja pindah ke Dili dari Tutuala (Lautém), di mana dia aktif terlibat dalam gerakan klandestin. Dia tinggal dengan saudaranya di Colmera pada saat serangan. Pada 11 Juni dia ditangkap oleh Pasukan Khusus dan dibawa ke markas mereka di dekat sana. Setelah mengunjungi Adriano secara teratur di markas Kopassandha, saudaranya diberitahu suatu hari bahwa Adriano tidak ada di sana. Saudaranya tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan Adriano. Menurut satu sumber, dia dibawa ke Comarca (Balide) dan lenyap dari sana.⁵⁰¹

491. Namun, apakah seseorang lenyap atau dieksekusi sifatnya sangat acak. Keempat orang komandan Falintil yang memimpin serangan ditangkap, tetapi hanya satu orang, Pedro Manek, yang dieksekusi atau hilang. Pemimpin klandestin

yang dituduh memimpin serangan, termasuk Mariano Bonaparte Soares dan David Ximenes, hidup. Namun, di antara ratusan orang yang ditangkap, ada tiga bersaudara dari Ossu—Antonio yang berusia 20 tahun, Sismundo yang berusia 18 tahun, dan Edmundo yang berusia 16 tahun—yang semuanya lenyap dari Comarca.⁵⁰²

492. Seperti waktu-waktu sebelumnya, apabila didekati oleh teman atau keluarga, pihak penguasa akan mengatakan bahwa korban “pergi sekolah” atau menjadi seorang TBO. Istri Adão Mendonça mengatakan kepada Komisi:

*Setelah saya ke rumah Kepala Desa bertanya tentang keberadaan suami saya, Kepala Desa menyatakan kepada saya bahwa “Ibu tidak perlu sibuk dengan dia. Mereka banyak yang dikirim Bapak untuk bersekolah dan belum pulang sekolah. Kita tunggu saja” Sampai detik ini, saya tidak mengetahui jelas keberadaan suami saya; hilang selama-lamanya.**

493. Anggota aparat keamanan melakukan penghilangan dan eksekusi di banyak tempat berbeda di Dili. Ratusan orang yang ditangkap dibawa ke Mes Korem (kemudian rumah jompo Kartika Sari) di Mandarin. Komisi menerima nama sembilan orang yang dilaporkan dibunuh atau hilang dari sana. Mereka yang hidup dibebaskan, dikirim ke Ataúro, atau dipindah ke Comarca (Balide), di mana 48 orang lain dilaporkan hilang atau meninggal karena perlakuan buruk, termasuk pemukulan dan kekurangan makan.[†]

494. Pada 16 Juni 1980, saat David Ximenes dibawa ke sana, sekitar 200 orang ditahan di Mes Korem.⁵⁰³ Interogasi di Mes Korem, yang secara teratur melibatkan penyiksaan berat dan kadang sampai membunuh, dilaporkan dilakukan oleh komandan Pasukan Khusus (Kopassandha) bernama M284, seorang perwira Pasukan Khusus lainnya bernama M285, dan perwira dari bagian intel Korem dan Kodim, M286, M287, dan M288.⁵⁰⁴ David Ximenes mengatakan bahwa interogasi pertamanya setelah tiba di Mes Korem, di mana dia tidak disiksa, dilakukan oleh komandan Korem, Kolonel Adolf Sahala Rajagukguk. Metode penyiksaan terhadap tahanan termasuk disetrum alat kelaminnya dan bentuk-bentuk penyiksaan seksual lainnya, direndam di tangki air, dan dicekik (lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan). Jordão Fernandes dilaporkan dicekik sampai mati di depan tahanan lain.⁵⁰⁵ Luis Mau Metan dilaporkan meninggal akibat dibenamkan di tangki air.⁵⁰⁶

495. Selama Juni, Juli, dan Agustus tahanan dipindah dari Mes Korem ke Comarca, meskipun orang-orang yang dicurigai yang baru ditangkap dibawa ke Mes Korem

* Wawancara CAVR dengan Maria de Fatima Martins, Seloi Malere, Aileu, tidak ada tanggal; untuk contoh lain penghilangan orang yang “dikirim sekolah” setelah serangan 10 Juni, lihat Pernyataan HRVD 06961; Profil Komunitas CAVR, Desa Liurai, Sub-distrik Aileu Kota, Distrik Aileu; Pernyataan HRVD 00949 mengutip kasus penghilangan orang yang katanya menjadi TBO.

† Pernyataan yang diterima Komisi juga melaporkan bahwa tahanan ditahan di Kodim Dili sebelum dipindah ke Mes Korem atau hilang [Pernyataan HRVD 0949, 8275, dan 8108].

sampai November. Di sana banyak tahanan ini dilaporkan disiksa, sekali lagi kadang sampai meninggal. Pada akhir Agustus, sekitar 200 tahanan yang ditangkap dalam kaitannya dengan serangan Juni ditahan di Blok 2, sementara tahanan lain ditahan di “Maubutar” dan sel isolasi.⁵⁰⁷ Selama periode ini, berbagai kelompok tahanan dibawa dari Comarca pada malam hari dan lenyap.⁵⁰⁸ Paling tidak, sembilan orang lain dipukuli sampai mati atau meninggal akibat kombinasi berbagai macam penganiayaan, termasuk pemukulan dan tidak diberi makan.⁵⁰⁹ Sel yang berjejal dan tidak memadainya makanan yang diberikan juga menjadi masalah berat. Tahanan-baru dilaporkan diberi makan satu kali sehari kalau beruntung: dilaporkan bahwa beberapa tidak diberi makan samasekali dan meninggal karena kelaparan.⁵¹⁰ Jumlah tahanan yang meningkat serta alokasi makanan yang tetap bagi tahanan berarti bahwa tahanan yang sudah berada di penjara sejak 10 Juni juga mengeluh makanan mereka dikurangi.⁵¹¹

496. Maria Immaculada, seorang perempuan muda yang terlibat dalam sebuah sel klandestin, ditahan pada 12 Juni 1980. Setelah diinterogasi dan disiksa di Mes Korem, dia dipindah ke Comarca di Balide di mana dia menyaksikan tahanan lain dibawa dari penjara pada malam hari dan lenyap:

Mereka mulai mengeluarkan orang sesudah jam 10 malam. Ada dua atau tiga mobil sudah menunggu di luar Comarca. Semua lampu dipadamkan. Mereka mengeluarkan tahanan dengan muka ditutup dan tangan diborgol, kemudian diangkut dengan mobil. Mereka mengeluarkan tahanan seperti itu sampai dua-tiga kali dalam semalam. Setelah itu lampu dinyalakan kembali seperti semula. Teman-teman yang dikeluarkan seperti ini, termasuk Afonso Moniz, João Barreto, dan José da Sousa, dulunya ia seorang Polisi Militer dari Viqueque, anaknya seorang mantri bernama Tito yang sudah mati. Tiga saudaranya yang bernama Antonio, Xismundo, dan Edmundo juga hilang sampai sekarang.⁵¹²

497. Komisi umumnya tidak menerima informasi yang menegaskan tentang tempat eksekusi orang-orang yang dilenyapkan. Deponen melaporkan bahwa korban dibawa ke Areia Branca di timur Dili, Tacitolu di barat Dili, Metinaro, dan Hera. Satu orang mengatakan bahwa dia dibawa dari tahanan di Kodim Dili ke Tacitolu di mana dia pikir akan dieksekusi. Dia ternyata tidak dieksekusi karena alasan yang tidak jelas.⁵¹³

498. Namun, Komisi percaya ada bukti kuat bahwa banyak orang yang lenyap dieksekusi di lokasi di Hera. Banyak orang dibawa ke Hera setelah serangan 10 Juni. Mereka ditahan di sana selama 40 hari, di mana mereka diwajibkan melakukan kerja paksa. Kebanyakan tampaknya hidup.⁵¹⁴ Salah satunya mengatakan kepada Komisi bahwa dia dibawa ke Fatuahi di mana dia melihat satu truk penuh orang

* Pernyataan HRVD 00949 dan delapan orang lain dikutip di “En Nome de Presos de 10/6/80”, CRRN Communiqué, 13 Juli 1983.

dengan mulut dibekap. Dia menyuruh saudaranya, seorang mantan komandan Falintil yang kini sudah meninggal, untuk memata-matai eksekusi yang terjadi di sana. Saudaranya melaporkan bahwa eksekusi sedang dilakukan di Besukaer, Fatu Banko, dan Rikalai Mate.⁵¹⁵ Komisi diberitahu bahwa mayat delapan orang yang ditangkap di Toko Baru dilaporkan dibuang di Fatu Banko (lihat paragraf 504 di bawah).

499. Orang-orang yang tinggal di daerah-daerah seperti Dare dan Becora, yang dekat lokasi serangan, sangat rentan menjadi sasaran pasukan keamanan di wilayah ini.

500. Dalam surat kepada Uskup Agung Leo Sukata di Jakarta, tertanggal 12 Juli 1980, Uskup Dili, Monsignor Dom Martinho da Costa Lopes, menjelaskan tentang pembunuhan lima orang di Dare setelah serangan 10 Juni:

Jumat 13/6/80: Norberto [Fernandes] menyerah kepada Korem didampingi Uskup Dili Monsignor Martinho da Costa Lopes, Pastor Ricardo, Wakil Umum Dioses Dili, dan Pastor J Falgueiras SJ, Rektor Seminari Santa Fatima [di Dare]. Monsignor Martinho mendesak salah satu komandan untuk melindungi Norberto, meminta agar dia tidak dipukuli atau dibunuh. Komandan menyetujui permintaan ini dan berjanji tidak menganiaya Norberto.

Beberapa hari kemudian Norberto dibawa ke Dare. Di sana, di aula Seminari... anggota Hansip memukul dan menyiksa dia sampai hampir mati...

Sabtu 21/6/1980: Norberto dibunuh dan mayatnya dibuang ke jurang di sebelah utara Seminari Santa Fatima.

Rabu 2/7/1980: Anastacio [Sarmiento] dianiaya secara kejam di halaman seminari Dare. Dia diikat ke tonggak jaring voli dan dipukuli di hadapan kerumunan orang. Setelah itu dia dibawa ke lokasi di kebun Seminari dan dibunuh. Di sana kuburan digali untuk dia karena, sebelum dipukuli, Hansip menyuruh penduduk setempat untuk menggali lubang.

Kamis 3/7/1980 José Manuel Martins (kerabat Anastacio), Maria Barreto (istri José Manuel Martins), dan Agustinho (kerabatnya Maria) dibunuh di Seminari Dare setelah mengalami penyiksaan kejam oleh Hansip lokal.⁵¹⁶

501. Baik Norberto Fernandes dan Anastacio Sarmiento dilaporkan dibunuh oleh Hansip yang dipimpin oleh M289.⁵¹⁷ Dua orang lain, Mau Ranik dan Dau Molik Inan, dilaporkan dibunuh oleh Hansip di Dare.⁵¹⁸

502. Penduduk Dare lainnya dilaporkan dibawa ke Mes Korem dan kemudian ke Comarca, mereka kemudian lenyap. Mereka termasuk: Gaspar José Soares Guterres, Adriano Mesquita, Marcos Soares, Raimundo Fatima, dan Tomás Soares.⁵¹⁹

503. Penduduk lain di dekat lokasi serangan juga dicurigai dan beberapa lenyap. Pada pagi hari 10 Juni, saat terjadi serangan, tiga bersaudara, Augusto Monteiro, Alberto Monteiro, dan Francisco Restoparte, bertugas jaga di pos Fatuloda (Balibar, Timur Dili). Saat berjaga mereka mendengar suara tembakan, tetapi tidak tahu dari arah mana atau mengapa terjadi tembakan. Pagi harinya empat Hansip dan dua ABRI, bersenjata lengkap, datang ke rumah mereka dan langsung memukul Augusto dan Alberto. Keduanya diikat ke pohon. Saat saudari mereka, Amelia, menengahi, dia ditikam dan diancam ditembak. Augusto dan Alberto kemudian dibawa pergi dan hilang. Beberapa hari kemudian Francisco ditangkap dan dia juga lenyap.⁵²⁰ Penduduk lain yang ditangkap di Balibar oleh unit Hansip yang sama termasuk Antonio Xavier, Martinho Saldanha, dan Domingos Caldeiras. Mereka juga lenyap.⁵²¹

504. Pasukan Batalion 744 menangkap banyak orang yang tinggal di sekitar barak Kompi B di Becora; beberapa orang yang ditahan Batalion 744 dilaporkan dieksekusi atau hilang. Mereka termasuk kelompok delapan orang dari Aiturilaran dan Mota Ulun—Vidal Soares, Domingos Soares, Bere Mali, Bere Mali Soares, Gaspar Araújo, Maurais, Bere Loek, dan Gaspar—yang bersembunyi di sebuah rumah Toko Baru (Culuhun) dan ditangkap oleh pasukan dari Batalion 744 pada 12 Juni, dan hilang. Tentara Batalion 744 membunuh mereka di Becora dan membuang mayat mereka di Fatu Banko, menurut keterangan satu deponen yang diberitahu oleh seorang anggota Batalion 744.⁵²² Batalion ini juga memobilisasi pasukan dari markasnya di Taibessi, yang juga menangkap penduduk yang kemudian lenyap. Di Suhu-Rama (Inur Fuik, Nain Feto, East Dili Timur) pasukan dari batalion ini menangkap sekitar 40 orang, termasuk paling tidak lima orang yang kemudian lenyap.⁵²³ Batalion 744 juga mendirikan pos di kapel di Balibar di mana mereka menahan penduduk setelah 10 Juni. Salah satu penduduk adalah Mateus Soares yang lenyap setelah dibawa dari rumahnya di Fatuloda ke kapel di Balibar.⁵²⁴

505. Koramil setempat juga melakukan penangkapan. Koramil Becora khususnya sangat aktif. Beberapa orang yang ditangkap kemudian lenyap atau meninggal akibat disiksa.[†]

September 1981: Eksekusi di Aitana dalam Operasi Pagar Betis

506. Antara Juni dan September 1981 tentara Indonesia melakukan perekrutan paksa puluhan ribu orang sipil Timor-Leste untuk dikerahkan dalam satu operasi militer besar-besaran untuk mencari dan menghancurkan resistansi bersenjata yang masih ada di gunung-gunung. Operasi ini resminya diberi nama Operasi Keamanan,

* Kelima orang yang dilaporkan lenyap adalah: Domingos de Fatima de Carvalho (dilaporkan lenyap dari Mes Korem) dan Jeronimo, José da Sousa, Maubuti, dan Tomás (semua dilaporkan lenyap dari Comarca) [Profil Komunitas CAVR, Suhu-Rama, Inuk Fuik, Sub-distrik Nain Feto, Dili Timur; dan "En Nome de Presos de 10 Junho 1980", CRRN Communiqué, 13 Juli 1983].

† Pernyataan HRVD 05666, 06983, dan 08037. Koramil Comoro juga dilaporkan menangkap orang-orang yang hilang [Pernyataan HRVD 05020].

tetapi dikenal oleh sebagian besar orang Timor-Leste sebagai Operasi Kikis, Operasi Pagar Betis, atau Gerakan Aitana (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik).

507. Sejumlah saksi mengatakan kepada Komisi bahwa kelompok yang mereka ikuti tidak terlibat dalam konflik bersenjata dengan Falintil, tidak melakukan penangkapan, tidak membunuh seseorang pun dalam seluruh operasi. Tetapi Komisi menerima keterangan mengenai beberapa pelanggaran mematikan selama operasi ini. Anselmo Fernandes Xavier, misalnya, mengatakan kepada Komisi bahwa ia pernah bersama satu kelompok Partisan yang menangkap dan kemudian mengeksekusi tujuh orang di dekat Cacavem di Subdistrik Lospalos.⁵²⁵ Abilio Quintão Pinto mengatakan kepada Komisi bahwa seorang anggota Falintil menyerang kelompoknya pada malam hari, membunuh empat prajurit ABRI sebelum ditembak mati.⁵²⁶ Seorang informan lain mengatakan kepada Komisi bahwa prajurit-prajurit yang bersamanya menangkap dan membunuh dua orang sipil di Uato Carbau.⁵²⁷ Komisi juga memperoleh kesaksian Domingos Guterres yang direkrut paksa dalam Gerakan Aitana. Ia menyaksikan penangkapan dan eksekusi seorang yang sudah tua serta melihat satu mayat yang kepalanya dipenggal, di satu tempat ketika mereka bergerak menuju Aitana.⁵²⁸ Seorang saksi lain bersaksi kepada Komisi mengenai pembunuhan seorang perempuan guru sekolah, yang dilakukan oleh anggota-anggota Yonif (Batalion Infanteri) 744, yang kemudian membawa dua anak guru tersebut. Keberadaan keduanya tidak diketahui.⁵²⁹ Beberapa orang narasumber melaporkan bahwa ketika mereka mencapai Aitana, mereka melihat dua orang ditangkap, diikat, dan dibunuh.⁵³⁰ Satu orang narasumber mengatakan kepada Komisi bahwa dirinya melihat tiga mayat ketika ia berjalan pulang dari Aitana ke Ossu.⁵³¹

508. Operasi Kikis mencapai puncaknya pada September 1981 dengan kesatuan-kesatuan militer dan TBO, termasuk anggota-anggota Yonif 321, 744, 745, Hansip, dan Marinir Indonesia, berkumpul di kawasan sekitar Gunung Aitana di perbatasan yang berbatu-batu antara distrik Viqueque dan Manatuto. Sejumlah besar pemimpin dan anggota Fretilin dan Falintil telah berkumpul di tempat itu pada Mei bersama dengan anggota-anggota keluarga dan orang-orang sipil lainnya untuk menyelenggarakan konferensi di Muabuai.⁵³² Dalam gerakannya dari Laleia di Manatuto menuju sisi utara Gunung Aitana, Yonif 744, dan kemungkinan Yonif 745,⁵³³ disertai oleh Marinir Indonesia, terlibat pertempuran dengan Falintil di dekat Sungai Weladada, yang terletak tepat di bawah Gunung Aitana dan Gunung Santo António. Di dekatnya, Fretilin/Falintil baru saja menyelesaikan konferensi nasionalnya di Muabuai. Pada 17 September hanya Kompi 4 Fera Lafaek yang berada di kawasan Aitana bersama penduduk sipil dalam jumlah besar. Menurut satu keterangan yang diperoleh Komisi, banyak orang sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, dibunuh ketika Yonif 744 mencapai kawasan Aitana dan menggempur para pejuang Resistansi selama tujuh hari.* Selain itu, Komisi juga mendapatkan keterangan bahwa sedikitnya 20 orang dari mereka dieksekusi di dekat Sungai

* Wawancara CAVR dengan José de Jesus dos Santos, Dili, 28 Juni 2004. Ia mengatakan bahwa pertempuran itu terjadi antara 1 dan 10 September.

Weladada oleh anggota-anggota Yonif 744.⁵³⁴ Komisi juga menerima kesaksian yang menunjukkan bahwa lebih daripada 100 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, kemudian dibunuh di lereng-lereng Gunung Aitana dan Gunung Santo António, dengan ditembak atau dibakar sampai mati di tanah berumput ilalang yang dibakar oleh ABRI. Setelah orang-orang yang hidup menyerah atau ditangkap, 25 orang lagi, semuanya dilaporkan terluka, di dekat Sungai Waidada, beserta lima orang lain dilaporkan dibunuh di markas Kotis di Waidada.⁵³⁵

Saksi-saksi pembunuhan massal di sekitar Gunung Aitana, September 1981

Sebastião da Cunha, seorang anggota Hansip yang ambil bagian dalam Operasi Pagar Betis, mengungkapkan kepada Komisi mengenai pembantaian di Aitana:

Pada tahun 1981 telah diadakan Operasi Kikis. Semua anggota Hansip diwajibkan ikut dalam operasi itu. Selama dua atau tiga hari rakyat diangkut secara paksa untuk mengikuti operasi tersebut... Saya dengan teman-teman [Hansip] yang bertugas di Laleia diangkut dengan kendaraan ke Manatuto dan tinggal di sini selama dua hari. Dari Manatuto kami diangkut ke wilayah Remexio dekat Aileu. Setelah tiga hari di Remexio Batalion 744 datang...dan membagi kami dalam kelompok untuk mengadakan Operasi Kikis. Dua orang anggota Hansip dibagi dalam satu kelompok bergabung dengan ABRI dan anggota masyarakat lainnya...Kami bergerak maju dari Remexio menuju Cribas...Kami terus beroperasi setiap hari menuju ke arah timur, hanya istirahat pada malam hari...

Setelah beberapa hari, kami sampai di Gunung Betuto dekat Aitana. Gunung Coibere terletak di tengah [antara] Gunung Betuto dan Aitana. Kami istirahat sejenak di tempat itu, namun tidak lama kemudian kami dengar bunyi senjata, rupanya ada kontak senjata antara Falintil dan ABRI di lokasi Oedada. Kami disuruh tinggal bersama penduduk di belakang. Kami sebagai anggota Hansip tidak bisa berbuat apa-apa. Kontak senjata mulai pada pukul 8 pagi sampai pada sore hari. ABRI menerobos masuk karena kekuatan tidak seimbang. Di lokasi itu banyak anggota Falintil ditembak mati. Batalion 744 dan pasukan Marinir dari Barique yang bergerak maju...

Lalu ABRI memanggil para anggota Hansip dan masyarakat turun ke Sungai Waidada. Kami melihat banyak sekali orang yang terbunuh, termasuk masyarakat sipil yang terdiri atas laki, perempuan, dan anak, yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Kami disuruh berhenti di tempat itu dan masing-masing mempersiapkan tempat tidurnya.

Pada pagi hari berikutnya, ABRI mulai beroperasi lagi di sekitar lokasi itu dan membunuh sisa-sisa masyarakat sipil yang masih hidup. Di antara yang dibunuh ada seorang laki-laki berbadan tinggi dan kulit putih yang sudah dikuburkan oleh masyarakat. [ABRI] menyuruh saya dan masyarakat menggali kembali dan [mayat itu] dibawa ke Kotis di Sungai Waidada karena mereka pikir orang itu adalah Xanana Gusmão. Ketika kami sampai di markas Kotis itu kami melihat manusia tidak bernyawa tanpa kepala, baik laki-laki maupun perempuan di lantai [dalam] beberapa baris. Tidak tahu hitung jumlahnya. Ada banyak orang sipil yang masih hidup, dipanggil ke markas Kotis itu. Mereka mengatakan orang-orang itu akan disuruh naik helikopter, tetapi yang terjadi sebaliknya. Mereka ditembak mati dengan metralhador dan tidak satu pun yang selamat dari maut. Waktu itu saya berdiri agak jauh dari mereka yang ditembak tetapi saya melihat dengan mata sendiri. Jumlahnya lebih dari duapuluh. Masyarakat sipil yang dibunuh di lokasi Waidada adalah kumpulan masyarakat dari berbagai tempat. Orang yang terluka akibat serangan dari ABRI di lokasi Waidada tidak diberikan obat, tetapi malah dibunuh semua di lokasi markas Kotis...

Di Waidada kami tinggal selama tiga hari. Kami tidak bisa makan dan minum karena air jernih yang mengalir di lokasi itu penuh darah manusia yang dibunuh oleh ABRI. Setelah itu kami berjalan menuju ke lokasi Santo António dekat Aitana dan Laline. Ketika sampai di Aitana kami berhenti dan tinggal di lokasi itu selama satu minggu. Di Aitana juga banyak penduduk sipil tak berdosa dibunuh. Tidak dapat dihitung jumlahnya. Saya lihat lima orang penduduk sipil dibawa ke Kotis dan dibunuh...Pembunuhan bukan hanya di Waidada, tetapi juga di sekitarnya. Perkiraan orang yang dibunuh berkisar seratus ke atas. Pembunuhan dilakukan mulai di lokasi Santo António, Waidada, Aitana, dan Fatuk-Kado⁵³⁶

Anacleto Ximenes baru berusia sekitar sepuluh tahun ketika ia menyaksikan pembunuhan massal ini. Ia termasuk dalam ratusan orang sipil yang bersama Fretilin/Falintil di Gunung Aitana:

Pada pagi hari, kami mendengar bunyi senjata dan kami sadar bahwa kami sedang dikepung. Tidak lama kemudian kami diserang, kami ditembak. Saat itu militer Indonesia bergabung dengan rakyat sipil. Rakyat sipil diatur dalam barisan depan, sambil memukul kentungan melalui jalan. Waktu itu jumlah kami banyak sekali, termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka [ABRI] menembak sambil teriak, namun saat itu kami tidak membuat perlawanan. Saya mencoba lari turun ke sungai, tetapi saya melihat di sungai itu [ABRI] mulai menembak teman-teman dan banyak yang meninggal...Saya bersama seorang anak seumur saya dan seorang Falintil, tetapi mereka berdua disambut dengan peluru tewas...Saya tetap dikejar sambil ditembak.

Saya jungkir balik ke sebuah sungai kecil. Di situ ada rumput banyak dan tebal. Kemudian saya sembunyikan diri di bawah rumput...

Saya tetap sembunyi di bawah rumput itu, lalu mendengar istrinya Komandan Maukalo yang hamil lari turun dan sedang duduk di bawah pohon kayu putih itu. Ibu itu kena tembakan tepat pada perutnya...dan bayinya juga ditembak. Saya melihat kejadian itu dari bawah rumput dan saya sangat ketakutan.

Mereka [ABRI] kemudian berteriak "Bakar rumput! Ada orang sembunyi di bawah rumput!" Saya pikir sebentar lagi api pasti menyala, daripada saya terbakar hangus seperti ular, lebih baik saya keluar supaya ditembak saja. Banyak tentara sedang berdiri dan mengawasi apakah kami keluar atau tidak. Sebelum saya lari keluar saya mengeluarkan empat kotak berisi peluru dan sebuah pisau dari dalam tas saya. Lalu saya keluar dari tempat persembunyian dan berdiri sambil mengangkat tangan dan berkata: "Menyerah, tuan."

Saya melihat dan tahu ada 160 orang [dibunuh]. Mereka 160 bukan saja dari tentara [Falintil], tetapi termasuk perempuan dan anak-anak. Mayat orang-orang itu kami bawa dan kumpulkan di sungai Waidada. Mereka yang berasal jauh dari sini hanya kepalanya dipenggal. Kami disuruh untuk memikul dan mengumpulkan di sungai Waidada. Kemudian diambil foto. Orang yang ditangkap hidup ada 25 orang, semua luka-luka. Lalu mereka diobati dan para tentara mengepung mereka. Saya berada di tangan Komandan 745, Iswanto. Kemudian mereka ini ditembak mati di tempat ini juga. Saya melihat dengan mata kepala bahwa mereka disuruh berbaris empat-empat untuk ditembak.⁵³⁷

509. Komisi menerima kesaksian mengenai beberapa pembunuhan tidak sah dan penghilangan lain yang terjadi pada 1981-1982. Pada 1981, Batalion 521 menangkap dan membunuh lima orang sipil di Bualale, Distrik Baucau.⁵³⁸ Pada tahun yang sama, di Lautém, 13 orang dikirimkan ke Pulau Jaco dan dieksekusi di sana. Mereka terdiri atas dua kelompok yang masing-masing terdiri atas enam orang, satu kelompok dari Luro, yang hanya Mateus, João Reis, José Reis, dan Adelino Moreira yang diketahui namanya, dan kelompok kedua berasal dari Tutuala, mencakup Carlos, Coroso, Cristoão, Reimalai, Pailuan, dan Gilberto, dan seorang yang bernama Macario Ximenes dari Maluro (Lore I, Lospalapor).⁵³⁹

510. Pada 1982, di Fuiloro (Lospalos, Lautém) sekelompok laki-laki dan perempuan ditangkap oleh Hansip, ditahan, dan disiksa di Kodim Lospalos; dua orang laki-laki dibunuh dan satu laki-laki lagi hilang.⁵⁴⁰ Pada Mei tahun yang sama, anggota-anggota Yonif 745 membunuh seorang perempuan hamil yang sedang mencari umbi-umbian di hutan di Wairoke (Luro, Lautém).⁵⁴¹ Pada Juni, dua orang sipil lagi, juga sedang mencari umbi-umbian, dibunuh oleh pasukan tentara Indonesia

di Subdistrik Moro.⁵⁴² Di Uatu Carbau (Viqueque) camat memerintahkan anggota-anggota Hansip setempat untuk menangkap 12 orang laki-laki. Mereka dipukuli dan dua orang meninggal dalam tahanan.⁵⁴³

Agustus-Desember 1982: Eksekusi dan penghilangan setelah serangan Falintil di kawasan Gunung Kablaki

511. Pada akhir 1982, setelah terjadinya serangan-serangan Falintil terhadap pasukan-pasukan tentara Indonesia di kawasan sekitar Gunung Kablaki (di Distrik Ainaro dan Manufahi) pada 20 Agustus 20,* personel militer Indonesia melakukan pembunuhan dan penghilangan banyak orang sipil di wilayah Distrik Ainaro.⁵⁴⁴ Ketika kesatuan-kesatuan militer Indonesia dari Maubisse dan Ainaro berkumpul di Dare dan Mau Chiga (Ainaro) dan Rotuto (Manufahi), para pejuang Resistansi dan banyak penduduk setempat lari menyelamatkan diri ke Gunung Kablaki. Banyak dari yang tidak lari ditahan di Kodim Ainaro. Setelah Mau Chiga diserang dalam pembalasan oleh militer Indonesia, beberapa ratus orang dipindahkan ke Pulau Atauro, yang membuat desa nyaris kosong (lihat Bab 7.3: Pemandangan paksa dan kelaparan).⁵⁴⁵ Dalam minggu-minggu dan bulan-bulan setelah serangan tersebut, personel militer Indonesia, khususnya dari Kodim Ainaro, Koramil Dare, dan Batalion Zeni Tempur (Zipur) 5 melakukan banyak penangkapan, menggunakan penyiksaan dan perkosaan dalam interogasi, membakar habis rumah penduduk, dan membunuh penduduk sipil, kadang-kadang di depan umum (lihat Bagian 6: Profil pelanggaran Hak Asasi Manusia; Bab 7.3: Pemandangan paksa dan kelaparan; Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan; Bab 7.7: Kekerasan pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual).

512. Komisi menerima keterangan mengenai pembunuhan tidak sah dalam periode ini. Menurut sebagian keterangan, Komandan atau Wakil Komandan Batalion Zipur 5 melakukan eksekusi di depan umum seorang laki-laki dengan memenggal kepalanya dengan kapak, memaksa anggota batalionnya memakan bagian-bagian kepala korban, dan memamerkan foto-foto kepala yang dipenggal itu kepada penduduk setempat.⁵⁴⁶ Seorang laki-laki yang dicurigai memberikan makanan kepada Falintil ditangkap oleh Hansip dan ditahan di Koramil di Dare. Setelah satu atau dua bulan ditahan, ia dibawa ke tempat umum di dekat markas Koramil, ditelanjangi, dan ditanyai di depan umum di hadapan para personel Hansip, Koramil, dan Zipur 5. Pada setiap pertanyaan, seorang anggota tentara menusuk jari-jari, tangan, lengan, pipi, dan dahinya. Seorang penduduk desa setempat kemudian disebutkan dipaksa membunuhnya, dan tangannya kemudian digantung di sebatang pohon, dan orang-orang takut untuk menurulkannya.⁵⁴⁷ Laporan-laporan lain tentang eksekusi yang diterima Komisi termasuk tentang satu orang laki-laki yang ditahan di Koramil Dare yang diseret dengan sepeda motor dan dibakar hidup-hidup, dan seorang laki-laki lain yang

* Serangan-serangan dilakukan oleh Falintil dan penduduk desa dari Mauchiga, Rotuto dengan sasaran Koramil di Dare, Koramil dan Polsek di Hatu Builico (Ainaro), dan pos-pos Hansip di Aitutu, Raimerhei, dan Rotutu (Manufahi).

“diikat seperti Yesus” dan ditembak di sebuah sekolah dasar di Dare.⁵⁴⁸ Organisasi resistansi, CRRN, juga melaporkan bahwa dua orang anggota resistansi bersenjata yang ditangkap atau menyerah antara 22 dan 24 Agustus disiksa dan dieksekusi di Koramil di Ainaro.⁵⁴⁹

513. Dalam pembalasan terhadap serangan Agustus, di desa tetangga Rotuto (Manufahi), anggota-anggota militer Indonesia membariskan penduduk sipil dan mengancam membunuh mereka. Alberto Alves mengatakan kepada Komisi:

Pada tahun 1982, gencatan senjata antara Falintil dan ABRI dan Hansip terhenti di Desa Rotuto. Setelah Falintil kembali ke hutan, tentara [Batalion] 745 dan anggota-anggota Hansip menyuruh kami berbaris, perempuan di barisan tersendiri bersama anak-anak, kami laki-laki berbaris terpisah. Setelah berbaris, tentara 745 mau menembak mati kami. Namun, ada seorang anggota tentara 745 asal Bobonaro (Maliana) yang tidak setuju menembak kami, jadi pembunuhan dihentikan.⁵⁵⁰

514. ABRI mencari orang-orang yang melarikan diri, dan dalam proses ini membunuh sejumlah orang. Laurinda dos Santos mengingat:

Saya dan 95 penduduk lainnya melarikan diri ke hutan di Kablaki, ke sisi gunung wilayah Same. Kemudian tentara Indonesia mengejar kami dan mereka menembak mati teman kami Domingos Lobato. Mereka menangkap saya dan penduduk lain yang berjumlah 95 orang itu.⁵⁵¹

515. Seorang deponen lain mengatakan kepada Komisi bahwa seorang Timor-Leste anggota Hansip yang beroperasi bersama pasukan Indonesia secara tidak sengaja menembak seorang prajurit Indonesia dan orang ini segera dieksekusi.⁵⁵² Orang-orang lain dieksekusi ketika berada dalam tahanan di Dare.

Di pos [Batalion] 321 Dare, saya melihat Hansip M290 bersama [anggota] Batalion 321 memukul teman saya bernama Alberto. Saya melihat M290 memukul dengan senjata pada dada Alberto. Pukul dahi, kemudian memukul pada tangan dan kaki sampai mati... Hansip M290, M291, dan M302 sudah menggali kuburan untuk menguburkan mayat Alberto, tiba-tiba Alberto hidup kembali mau lari. Hansip M291 menangkapnya...M290 mengambil parang dan memotong leher korban hingga putus, kemudian Hansip Orlando memotong sepuluh jari tangan M291 untuk dimasak dan diberikan kepada kami yang dibawa dengan paksa ke pos ABRI di Dare.⁵⁵³

516. Menurut satu laporan lain, satu orang laki-laki disiram minyak tanah dan dibakar oleh seorang prajurit dari Batalion 321.⁵⁵⁴ Orang-orang lain dibawa oleh pasukan keamanan Indonesia, termasuk anggota-anggota Komando Pasukan

Sandhi Yudha (Kopassandha) dan Hansip, ke Builico dan dieksekusi di satu tempat yang umum disebut Jakarta 2.⁵⁵⁵

Jakarta 2: Sebuah tempat eksekusi

Dalam minggu-minggu setelah serangan Falintil terhadap Mau Chiga banyak orang sipil yang dicurigai bersimpati pada Resistansi ditahan di markas Kodim di Ainaro dan dieksekusi di Builico, satu jurang di sebelah selatan kota Ainaro, yang dinamakan Jakarta 2 oleh militer Indonesia.⁵⁵⁵ Komisi menerima keterangan-keterangan dari Mau Chiga, Hato Builico, dan Dare mengenai orang-orang yang dieksekusi dan mayat mereka dibuang ke dalam jurang di Jakarta 2, kadang-kadang setelah dibakar hidup-hidup. Menurut satu kesaksian, seorang anak dari sekolah di Dare dimasukkan ke dalam kantong plastik, disiram bensin, dan dibakar sebelum dilemparkan ke jurang Jakarta 2.⁵⁵⁶ Satu keterangan lain menyebutkan bahwa empat orang ditahan di Kodim Ainaro dan kemudian dibawa ke Jakarta 2, di mana tiga orang dari mereka—satu orang dari Zumalai dan dua orang dari Dare—dieksekusi.⁵⁵⁷ Menurut kesaksian yang diberikan kepada Komisi, tahanan-tahanan yang ditahan di Ainaro biasanya diikat dan dibawa ke jurang pada tengah malam, di sana mereka ditusuk dan dilemparkan ke dalam jurang.

Pukul 01.00 larut malam para tahanan dimasukkan dalam karung, diikat rapat, dan diangkut dengan sebuah mobil Kijang berwarna biru dan diantar sampai di pinggir jalan, karung-karung itu dilepas, mereka disuruh berdiri kemudian ditusuk dengan pisau dan dilepas. Orang itu didorong jatuh turun ke jurang yang dalam...⁵⁵⁸

Komisi juga menerima keterangan-keterangan mengenai pembunuhan orang-orang desa dari Mulo, Nunumogue, dan Mau Chiga di Jakarta 2 tidak lama setelah serangan Agustus. Untuk seorang perempuan pada waktu itu, satu-satunya alternatif selain kematian di Jakarta 2 adalah diperkosa dan diperbudak secara seksual.⁵⁵⁹

Selain pembunuhan di luar hukum di Jakarta 2, sejumlah besar orang di Ainaro hilang pada periode itu. Menurut kesaksian yang disampaikan kepada Komisi, eksekusi-eksekusi terjadi di Jakarta 2, dan sepanjang dasawarsa 1980-an dan 1990-an personel militer Indonesia dan petugas pemerintah sipil mengancam penduduk “dibawa ke Jakarta.” Komisi mendapatkan keterangan

* Di antara yang ditahan di Kodim Ainaro dan dibunuh di Builico setelah serangan Agustus 1982 adalah Ouei-Beri, Adelina Barbosa (perempuan), Mateus Jerónimo, Leto-Mali, Cirilo Alves, Gabriel, Lorenzo, Daniel de Araújo, Oscar Araújo, António Mau Kura. Lihat Lampiran G, Tim Penelitian Perempuan CAVR, Perempuan dan Konflik, April 1974-Oktober 1999, Februari 2004.

yang menunjukkan bahwa TNI mungkin telah membuang mayat sedikitnya seorang korban kekerasan September 1999 dengan melemparkan mayatnya ke dalam jurang Jakarta 2:

Pada 21 September 1999, seorang anggota milisi/TNI, M304 dan empat orang lain memaksa orang untuk pergi ke Atambua. Mereka menembak kepala aldeia Lebulau, Liquiça, tetapi tidak kena. Mereka memerintahkan orang yang bernama Feliz de Aldoreida untuk memanjat tiang bendera. Mereka menembaknya sampai ususnya keluar dan melemparkan pedang kepadanya. Ia jatuh. Mereka membuang mayatnya dengan melemparkan ke Jakarta 2.⁵⁶⁰

517. Kesaksian-kesaksian yang diterima oleh Komisi yang berhubungan dengan serangan Mau Chiga dan pembalasan militer Indonesia menyebutkan pembunuhan tidak sah terhadap sekitar 20 orang laki-laki. Komisi juga menerima satu daftar yang mengidentifikasi 14 orang anggota Falintil dan 18 orang sipil yang disebutkan dibunuh atau hilang dalam hubungan dengan insiden itu.⁵⁶¹ Seluruhnya Komisi menerima laporan-laporan bahwa orang-orang sipil berikut ini dibunuh atau dihilangkan:

Tabel 19: Orang sipil yang dibunuh atau dihilangkan dari Ainara dan Manufahi, 1982, yang dilaporkan kepada CAVR*

| Nama | Tanggal | Tempat | Usia | Keterangan | Sumber |
|-------------------|-----------------|--------------|------|------------|-----------------|
| Buimali | sekitar 20/8/82 | Mauchiga | - | ditembak | 7231 |
| João Tilman | 20/8/1982 | Mauchiga | 32 | dipenggal | 7191, 7269 |
| Ernesto | Agustus 1982 | Kodim Ainara | - | ditembak | 7191, 7269 |
| Domingos Lobato | 1982 | Kablaki | - | ditembak | 7241 |
| Gebo Antonio José | 1982 | Kablaki | - | hilang | 9018 |
| Trindade | 1982 | Kablaki | - | dipenggal | 4923 |
| Kusia | 1982 | Daisua | - | dipenggal | 4923, PK Mau. |
| Alarico | 1982 | Daisua | 25 | ditembak | Daftar; PK Mau. |
| Mau-Sur | 1982 | Daisua | 50 | dipenggal | Daftar; PK Mau. |
| Mateus | 1982 | Daisua | 55 | dipenggal | Daftar; PK Mau. |

* Pernyataan HRVD 7177; 7186; 7204; 723; 7231; 7241; 7242; 7253; 7255; 7256; 7258; 7191; 7269; 4923; 6257; 9018; "Daftar korban di Mauchiga, 1982," Submisi kepada CAVR dari Abílio dos Santos Belo, 3 Juni 2003.

| | | | | | |
|------------------|------|----------------|----|---------------|------------------|
| Manuel Berelau | 1982 | Daisua | - | dibunuh | PK Mauchiga |
| Verdial Lopes | 1982 | Daisua | - | dibunuh | PK Mauchiga |
| Armando | 1982 | Nunomogue | - | ditembak | 7242; PK Nmg |
| Paulino | 1982 | Nunomogue | - | ditembak | 7255 |
| Alberto | 1982 | Dare | - | dipenggal? | 7258, 07253 |
| Tomás Tilman | 1982 | Dare | - | dibakar | Tim Feto, PK |
| Quei-Bere | 1982 | Dare | 35 | dieksekusi | Daftar; PK Dare |
| Clementino Baloc | 1982 | Casa | - | dibunuh | 6257 |
| Cristina Lawa | 1982 | Casa | - | dibunuh | 6257 |
| António Mau-Kura | 1982 | Jakarta 2 | - | dibakar mati | List, 07256 |
| Beremali | 1982 | Jakarta 2 | - | dieksekusi | 4923 |
| Berleki | 1982 | Jakarta 2 | - | dieksekusi | 4923, 07204 |
| Besimau | 1982 | Jakarta 2 | - | dieksekusi | 4923 |
| Mau Felix | 1982 | Jakarta 2 | - | dieksekusi | 4923 |
| Adelina Barbosa | 1982 | Jakarta 2 | 25 | dieksekusi | Daftar |
| Mateus Jerónimo | 1982 | Jakarta 2 | 35 | dieksekusi | Daftar |
| Leto Mali | 1982 | Jakarta 2 | 40 | dieksekusi | Daftar |
| Daniel de Araújo | 1982 | Jakarta 2 | 50 | dieksekusi | Daftar |
| Oscar Araújo | 1982 | Jakarta 2 | 25 | dibakar hidup | Daftar; PK Nnmg. |
| Cirilo Alves | 1982 | Jakarta 2 | 39 | dieksekusi | Daftar, PK Dare |
| Lourenço Soares | 1982 | Jakarta 2 | 39 | dieksekusi | Daftar, 7186 |
| Gabriel da Costa | 1982 | Jakarta 2 | 41 | dieksekusi | Daftar, 7177 |
| Orlando Tilman | 1982 | Lisuati | 50 | ditembak | Daftar |
| Rodolfo Tilman | 1982 | Lisuati Balisa | 49 | ditembak | Daftar |
| Valente | 1982 | Hatuquero | 35 | ditembak | Daftar |
| Bere Mau | 1982 | Rotuto | 45 | ditembak | Daftar |

518. Menurut laporan-laporan yang diterima oleh Komisi, pembunuhan tidak sah terhadap pendukung-pendukung kemerdekaan, termasuk eksekusi di muka umum dan pembunuhan dalam tahanan, terus berlanjut setelah serangan 1982. Misalnya, Komisi menerima laporan-laporan bahwa pada 1983, seorang Timor-Leste, petugas polisi, diikat pada bagian belakang sebuah mobil dan ditarik keliling kota sepanjang hari, setelah itu tubuhnya dibakar di depan pasar di Ainaro.⁵⁶² Komisi juga mendapatkan keterangan bahwa empat orang yang dicurigai menjadi anggota gerakan bawahanah—Moises Araújo, Lourenço Araújo, João Xavier, dan Oscar—ditahan dan dikurung di dalam tahanan selama beberapa minggu,⁵⁶³ kemungkinan besar oleh anggota-anggota Chandraça 11, satu unit Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Mereka dieksekusi di Hato-Udo pada satu waktu antara Mei dan Juli 1984 dan mayat mereka kemudian dikuburkan di Hato-Udo.⁵⁶⁴

Agustus-Oktober 1983: Pembunuhan di Viqueque setelah Insiden Kraras

Pelanggaran sebelum Pemberangkatan Kraras

519. Mulai 1976 sampai 1978-1979, kebanyakan penduduk Bibileo tinggal di pegunungan di luar kekuasaan Indonesia. Orang-orang yang menyerah atau tertangkap pada 1978-1979 ditempatkan di kota Viqueque, tempat mereka tinggal selama beberapa tahun. Pada 1981 mereka dipindahkan ke suatu lembah datar di utara jalan Viqueque-Luca, tetapi tepat di selatan Bibileo, yang berada pegunungan lebih utara lagi. Permukiman baru ini disebut Kraras.

520. Komisi mendapatkan laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Kraras pada 1982 dan awal 1983. ABRI mulai curiga bahwa kesatuan Ratih setempat sedang bekerja secara klandestin untuk Resistansi, dan pada akhir 1982, 80 orang dari mereka dikirimkan ke Tacitolu di mana mereka diawasi oleh anggota-anggota Yonif 744 yang “menghukum” mereka. Sekitar waktu yang sama dua orang dari Kraras—Loi Rubik dan Susukai—dibunuh karena mereka dicurigai “bermuka dua”; Loi Rubik adalah anggota Ratih.⁵⁶⁵

521. Serangkaian pertemuan antara tentara Indonesia dan Fretilin/Falintil menghasilkan kesepakatan gencatan senjata pada akhir Maret 1983, yang membuat pertempuran banyak berkurang dan memberikan kebebasan bergerak relatif bagi para pejuang Resistansi dan penduduk sipil (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Selama gencatan senjata, para pejuang Resistansi yang beroperasi di pegunungan di atas Viqueque bertemu dengan tentara Indonesia dan menyelenggarakan upacara bendera yang dihadiri oleh anggota-anggota pasukan Hansip setempat dan orang-orang sipil dari Bibileo/Kraras.

522. Akan tetapi, ketegangan antara tentara Indonesia dan penduduk setempat tetap ada. Juga ada laporan-laporan mengenai konflik antara orang-orang Timor-Leste anggota Hansip dengan tentara Indonesia. Pada waktu gencatan senjata, tentara Indonesia sedang dalam proses mereorganisasi berbagai pasukan pertahanan sipil di

Timor-Leste. Reorganisasi ini mencakup penurunan kedudukan personel pertahanan sipil dari Hansip, yang bersenjata dan digaji, menjadi Ratih (Rakyat Terlatih), yang tidak bersenjata dan tidak mendapatkan gaji tetap. Penduduk Bibileo mengatakan kepada Komisi bahwa Ratih menolak menyerahkan senjata mereka setelah satu detasemen dari Batalion Lintas Udara 100 menembak dan membunuh empat orang penduduk setempat.⁵⁶⁶ Sejumlah sumber juga mengatakan kepada Komisi bahwa dalam Juli 1983 tentara Indonesia melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan setempat, termasuk istri dari seorang Timor-Leste anggota Ratih.⁵⁶⁷

Pemberontakan di Viqueque

523. 8 Agustus 1983 pasukan Falintil dan anggota-anggota Ratih setempat di bawah komando Virgilio dos Anjos (Ular Rheik) melakukan serangan gabungan terhadap satu pos militer Indonesia di Kraras. Empat belas prajurit Indonesia dari Batalion Zeni Tempur (Zipur) 9 dibunuh; satu atau dua orang selamat melarikan diri. Anggota-anggota Ratih melarikan diri, bersama dengan aktivis-aktivis klandestin dari desa, ke gunung untuk bergabung dengan Falintil. Tidak lama kemudian ratusan penduduk Kraras dan *aldeia-aldeia* sekitarnya juga melarikan diri ke hutan. Sehari kemudian kelompok lain Ratih di Desa Buanurak (Ossu, Viqueque), dipimpin oleh Domingos Raul (Falur) juga membelot dari pasukan keamanan Indonesia untuk bergabung dengan Fretilin/Falintil.⁵⁶⁸

524. Komisi menerima laporan mengenai empat serangan Falintil di wilayah Distrik Viqueque pada bulan-bulan pertama setelah serangan Kraras. Di Lacluta, Falintil dilaporkan menyerang satu pos Indonesia, membunuh tiga orang Timor-Leste. Pada 10 Agustus 1983 Falintil tembak-menembak dengan pasukan dari Yonif 745 di Nahareka, dengan akibat seorang Timor-Leste terluka dan kemudian dieksekusi oleh pasukan Indonesia. 19 Agustus 1983 pasukan Falintil dilaporkan melakukan satu serangan di Bahatata, Uatu Carbau, membunuh satu orang sipil. Pada 6 September Falintil menyerang pasukan Indonesia di satu tempat bernama Sukaer Oan di Desa Caraubalau, tetapi tidak ada korban.⁵⁶⁹

Pembalasan Indonesia di sekitar Kraras

525. 7 September 1983, satu hari setelah serangan Falintil di Caraubalau, pasukan tentara Indonesia memasuki Desa Kraras yang sudah kosong dan membakar hampir semua rumah di sana. Komisi mendapatkan keterangan bahwa 4-5 orang yang masih tinggal di desa, termasuk seorang perempuan tua, dibunuh dalam serangan ini. Mayat dari beberapa orang yang dibunuh dikatakan ditinggalkan di rumah masing-masing, yang kemudian dibakar.⁵⁷⁰ Dalam minggu-minggu selanjutnya tentara Indonesia mengadakan patroli di pegunungan sekitar dan memaksa orang-orang yang melarikan diri untuk kembali ke Desa Kraras dan Buicaren, serta kota Viqueque. Komisi menerima laporan bahwa sejumlah orang dieksekusi dalam operasi-operasi ini, termasuk seorang anak laki-laki berusia 15 tahun pada atau sekitar 12 September, dan tiga orang lainnya pada 15 September.⁵⁷¹ Dalam waktu

itu sejumlah besar orang juga ditahan dan disiksa, banyak di Olobai, di mana satu kompi dari Batalion 745 bermarkas.

Pembantaian di Caraubalau

| Tabel 20: Orang-orang yang dibunuh di wilayah Kraras, September 1983, yang dilaporkan kepada CAVR | | | | | |
|---|--------------|------------|------|-----------|-----------------------|
| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
| Joaquim Amaral | 7 Sep. 1983 | Kraras | - | - | ditembak/ dibakar? |
| Funu Lequi | 7 Sep. 1983 | Kraras | - | - | ditembak/ dibakar? |
| Ana Maria | 7 Sep. 1983 | Kraras | - | - | ditembak/ dibakar? |
| Namo Funuk | 7 Sep. 1983 | Kraras | 80 | - | ditembak/ dibakar? |
| Domingos Gomes | 12 Sep. 1983 | Uma K'ik ~ | 15 | - | ditembak |
| Euclides da Costa S. | 15 Sep. 1983 | Haiboho | - | - | ditembak |
| Wailiba | 15 Sep. 1983 | Haiboho | - | - | ditembak |
| Nahamodo | 15 Sep. 1983 | Olobai | - | Ratih | ditembak |

526. Komisi menerima laporan tentang satu pembunuhan massal yang terjadi di Desa Caraubalau pada 16 September 1983.⁵⁷² Menurut satu keterangan, sejumlah besar penduduk dari Kraras yang awalnya lari ke Bibileo ditangkap oleh tentara Indonesia dan dibawa ke Viqueque, di mana mereka ditempatkan di satu gedung sekolah di Beloi. Pada pagi hari 16 September 1983 tentara Indonesia dan Hansip mengambil sedikitnya 18 dari mereka, termasuk perempuan dan anak-anak, dan membawa mereka ke Desa Caraubalau. Mereka diduga diserahkan kepada tentara Indonesia dari kesatuan lain, kemudian dibawa ke satu tempat bernama Welamo di mana mereka diperintahkan berdiri di satu lubang yang terbentuk karena tanah longsor dan dieksekusi di sana.⁵⁷² Seorang saksi mata mengatakan kepada para penyelidik dari PBB:

Tiga orang Hansip berjalan di depan dan anggota tentara mengelilingi kelompok orang sehingga tidak satu orang pun bisa melarikan diri...Kami mulai berjalan sekitar pukul 3 sore dan tiba di satu tempat di gunung sekitar pukul 4 sore...Kami duduk dan tentara mengelilingi kami supaya tidak ada yang lari...Kemudian datang

* Narasumber lain menyebutkan satu pembantaian di "Casese," tetapi ini agaknya adalah insiden Caraubalau. Lihat Wawancara CAVR dengan José Gomes, Lalerek Mutin, Viqueque, 8 Desember 2003, yang mengatakan bahwa 50 orang dibunuh pada 15-16 September.

tentara Indonesia lagi...Setelah mereka tiba kami diperintahkan berdiri. Saya bersama semua orang yang lain berdiri menghadap lembah. Kemudian kami disuruh berjalan. Saya baru berjalan satu langkah, tentara Indonesia melepaskan tembakan ke arah kami. Saya bersama saudara saya jatuh ke tanah. Orang-orang yang terkena tembakan jatuh di atas badan saya. Tentara Indonesia menembak semua orang dari belakang. Kemudian tembakan berhenti dan tentara beristirahat dan merokok. Satu orang tentara Indonesia menyuruh Jerónimo [seorang komandan Hansip] berbicara dengan bahasa Tetum untuk menyuruh yang masih hidup...berdiri...Tidak ada yang menjawab perintah ini. Kemudian tentara menembak lagi mayat-mayat yang tergeletak di sana. Kemudian saya mendengar dua anak kecil. Ketika tentara menembak, mereka tidak kena. Kemudian Jerónimo...mendekat, dua bayi itu dan mengambil sebilah pisau, menikamkannya sampai mereka mati. Kemudian [tentara] Indonesia dan Hansip beristirahat dan merokok lagi.⁵⁷³

527. Para narasumber memberikan angka yang berbeda untuk jumlah korban, mulai yang rendah, 17, sampai yang tinggi, 54.* Komisi telah menyusun daftar korban yang dieksekusi di Caraubalau berikut ini:

Tabel 21: Orang sipil yang dibunuh di Caraubalau, Viqueque, 16 September 1983, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Umur | Jenis Kelamin |
|------------|------|---------------|
| Basi Nono | 56 | Laki-laki |
| Bere Nahak | 33 | Laki-laki |
| Bere Lirik | 21 | Laki-laki |
| Bosi Dasi | 48 | Laki-laki |
| Bosi Naha | 16 | Laki-laki |
| Bui Nahak | 7 | Laki-laki |
| Builai | 50 | Perempuan |
| Builoi | 29 | Perempuan |
| Dare Modo | - | Perempuan |
| Dasi Leki | 46 | Perempuan |

| Nama | Umur | Jenis Kelamin |
|---------------------|------|---------------|
| Anak dari Dasi Leki | - | - |
| Anak dari Dasi Leki | - | - |
| Dasi Rubik | 35 | Perempuan |
| Filomena Amara | 27 | Perempuan |
| Francisca | 19 | Perempuan |
| Hae Boe | 17 | - |
| Hare Kaik | 28 | Perempuan |
| Hari Lequi | 25 | Perempuan |

* Keterangan ini didasarkan pada Wawancara Unit Kejahatan Berat dengan José da Costa Carvalho; lihat pula Wawancara CAVR dengan Jerónimo da Costa Amara, Viqueque, 10 Maret 2004, yang mengatakan bahwa korbannya 18 orang; Filomena de Jesus Sousa, Lalerek Mutin, Viqueque, 10 Maret 2004, yang mengatakan bahwa korbannya 26 orang; dan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004, yang mengatakan bahwa korbannya 54 orang.

| Nama | Umur | Jenis Kelamin |
|-------------|------|---------------|
| Hare Loi | 46 | Perempuan |
| Hare Modo | 40 | Perempuan |
| Hia Lequi | 23 | - |
| José Soares | 17 | Laki-laki |
| Kai Bosi | 6 | Laki-laki |
| Kai Ho'o | 11 | Laki-laki |
| Kai Ho'o | 51 | Laki-laki |
| Kai Mui | 14 | Laki-laki |
| Kai Rubik | 23 | Laki-laki |
| Kai Uai | 32 | - |
| Kena Kaik | 3 | Perempuan |
| Kena Liri | 24 | Perempuan |
| Kena Olo | 35 | Perempuan |
| Lau Loi | 35 | Perempuan |
| Labu Olo | 36 | Perempuan |
| Leki Labu | 61 | Laki-laki |
| Leki Mono | 48 | Laki-laki |
| Leki Uai | 2 | Laki-laki |
| Liba Bosi | 21 | Perempuan |
| Loi Uai | 1 | Perempuan |

| Nama | Umur | Jenis Kelamin |
|-------------------|------|---------------|
| Madalena A. Sousa | 31 | Perempuan |
| Martinha Amaral | 27 | Perempuan |
| Martinha Tilman | 26 | Perempuan |
| Naha Bosi | 36 | Laki-laki |
| Naha Lirik | 27 | Laki-laki |
| Olo Berek | 61 | Laki-laki |
| Olo Bosi | 4 | Laki-laki |
| Olo Lohi | 7 | |
| Pai Rubik | 31 | Laki-laki |
| Sahe Mau | 49 | Perempuan |
| Sahe Uai | 40 | Perempuan |
| Siba Labu | 49 | Perempuan |
| Tali Bai | 25 | Perempuan |
| Tali Bosi | 16 | Laki-laki |
| Tali Bosi | 16 | Laki-laki |
| Tali Dasi | 24 | Perempuan |
| Tali Deki | 34 | Perempuan |
| Wono Kai | 3 | Laki-laki |

Pembantaian di Tahu Bein

528. Pada 17 September 1983, militer Indonesia mendekati sekelompok pengungsi dari Kraras yang telah melarikan diri ke dekat Desa Buicaren. Desa Buicaren dikepung dan orang-orang yang berasal dari Kraras ditangkap. Yang laki-laki dipisahkan dari perempuan dan disuruh pergi ke Kraras di bawah pengawasan militer untuk mengangkut makanan. Menurut satu laporan, 6-8 orang tentara Indonesia dan dua orang Hansip Timor-Leste mengawal puluhan laki-laki menuju Sungai Wetuku di satu tempat yang dikenal sebagai Tahubein, di mana mereka dikepung dan ditembaki. Hanya satu orang yang dilaporkan selamat dari pembantaian ini. Seorang narasumber memberikan uraian berikut ini:

Semua laki-laki disuruh berbaris dari Buicaren. Pasukan ABRI bersama Hansip mengatakan kepada kami, "Kalian laki-laki hari ini kembali ke Kraras untuk mengambil bahan makanan." Maka berangkatlah kami ke arah Kraras lewat daerah Tahubein. Kami dikawal oleh Hansip, polisi, Kodim, dan pasukan lainnya dari Batalion 501. Sampai di daerah Tahubein pasukan meminta kepada kami agar menyanyikan lagu Foho

Ramelau. Tetap tidak ada orang yang berani menyanyikan lagu tersebut. Kemudian mereka menyuruh kami untuk menghitung satu, dua, tiga. Sampai pada hitungan ketiga kami langsung dikejutkan dengan suara tembakan. Ketika suara tembakan saya langsung menjatuhkan diri terlebih dahulu. Begitu saya jatuh teman-teman lainnya jatuh di atas saya. Badan saya penuh berlumuran darah. Setelah selesai menembak mereka periksa satu per satu. Apakah yakin sudah meninggal semua atau belum. Saya mendengar suara dari Hansip mengatakan, “Kalau ada yang masih hidup, berdirilah dan pergi bersama kami.” Saya mendengar itu, tetap saja tidak mau bergerak. Kemudian saya merasa bahwa dua orang teman saya berdiri dan seketika itu juga mereka langsung menembaknya. Setelah itu pasukan pergi dari lokasi pembantaian. Saya merasa yakin bahwa setelah pasukan sudah tidak ada baru saya bangun, kemudian melarikan diri ke hutan.⁵⁷⁴

529. Komisi menerima laporan-laporan mengenai keterlibatan berbagai kesatuan ABRI dalam pembantaian ini, termasuk Kodim 1630/Viqueque, Yonif 328, Yonif 501, dan Yonif 745, serta Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha). Ada laporan yang bertentangan mengenai jumlah korban yang dibunuh di Tahubein, angkanya berbeda-beda dari yang rendah, 26, sampai yang tinggi, 181.⁵⁷⁵ Komisi mendapatkan nama 141 korban, semuanya laki-laki.

Tabel 22: Orang sipil yang dieksekusi di Tahu Bein, Viqueque, 17 September 1983, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Umur | Nama | Umur | Nama | Umur |
|-----------------|------|-----------------|------|-------------------|------|
| Abel Soares | 40 | Antônio Alves | 28 | Bosi Nahak | 37 |
| Abilio Baptista | 28 | Armando | 29 | Cai Fonok | 29 |
| Abilio Gomes | 17 | Armando Bau Dai | 40 | Camilio Guterres | 39 |
| Agustinho Gomes | 31 | Bai Alak | 42 | Cancio Gomes | 20 |
| Agusto Gomes | 17 | Bai Lekik | 15 | Carlos Soares | 51 |
| Alak Nahak | 50 | Basi Dero | 58 | Constantino Gomes | 27 |
| Alfredo Nunes | 28 | Be Kikik | 29 | Daniel Braz | 25 |
| Alcino Gomes | 15 | Belarmino | 31 | Daniel Gomes | 20 |
| Ana Maria | 25 | Beni Kaik | 27 | Diku Funuk | 49 |
| Angelo Amaral | 27 | Beni Nahak | 18 | Dau Kaik | 59 |
| Antônio | 30 | Benjamim Alves | 49 | Dirgo Amaral | 33 |

* Wawancara CAVR dengan Miguel Viana, Viqueque, 17 Juli 2003, yang menyebutkan 181 yang dibunuh; Wawancara CAVR dengan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004, yang mengutip 143 yang dibunuh; Wawancara CAVR dengan Manuel de Jesus Pinto, Buicaren, Viqueque, 20 Maret 2004, yang mengatakan bahwa dirinya menghitung 82 mayat; lihat pula Pernyataan HRVD 04146, yang mengatakan bahwa 23 orang dibunuh dan tiga orang laki-laki—Antônio Naha Fahik, Toni Rubik, dan Leki Rubik—selamat; lihat pula Pernyataan HRVD 00155.

| Nama | Umur | Nama | Umur | Nama | Umur |
|----------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| Domingos Gomes | 30 | Kai Nahak | 30 | Nono Modo | 48 |
| Domingos Gomes | 17 | Kalti Leki | 18 | Olimpio Amaral | 23 |
| Dom. Naha Fonok | 30 | Labu Dekik | 62 | Olo Lirik | 38 |
| Domingos Ventura | - | Lau Kau | 10 | Olo Susuk | 46 |
| Duarte Tilman | 35 | Leandro Gomes | 50 | Paulino Gomes | 29 |
| Ernesto A. B. | 30 | Leki Kaik | 42 | Pedro | 42 |
| Eugenio Marques | 17 | Leki Lirik | 20 | Pedro de Araújo | 38 |
| Feliciano Amaral | 20 | Leki Mauk | 45 | Pedro F. Amaral | 23 |
| Feliciano Gomes | 50 | Lemo Rai | 29 | Raimundo Baptista | 62 |
| Fernando | 42 | Leopoldo Amaral | 28 | Rogéria Amaral | 23 |
| Fino Lekik | 15 | Leopoldo Brandão | 40 | Rubi Berek | 37 |
| Fino Lekik | 35 | Lihu Modo | 50 | Rubi Dahik | 60 |
| Fino Olok | 40 | Liku Lobu | 45 | Rubi Domok | 30 |
| Fono Leik | 37 | Loi Kaik | 47 | Rubi Fonok | 39 |
| Gaspar Nunes | 29 | Lui Nahak | 45 | Rubi Heuk | 45 |
| Gilberto | 30 | Manuel Soares | 49 | Rubi Kaik | 45 |
| Hana Rubik | 60 | Manuk Sesan | 45 | Rubi Katik | 34 |
| Heu Supu | 50 | Marcelino Gomes | 29 | Rubi Laik | 61 |
| Hia Bosi | 34 | Marciano Baptista | 40 | Rubi Lirik | 40 |
| Ilidio | 28 | Marcus Amaral | 18 | Rubi Modo | 27 |
| Jacob Gomes | 60 | Martinho Gomes | 40 | Rubi Nahak | 39 |
| Jaime de Jesus | 24 | Mau Kaik | 25 | Siko Loik | 49 |
| João Gomes | 33 | Miguel Gomes | 51 | Susu Beik | 35 |
| João Soares | 28 | Miguel Rangel | 25 | Susu Bosi | 37 |
| Joaquim Baptista | 23 | Miguel Soares | 39 | Tedi Susuk | 35 |
| Joaquim Gomes | 18 | Modo Liba | 54 | Teofilo | 30 |
| Joaquim Guterres | - | Naha Dedak | 27 | Tomás Brandão | 20 |
| Joolino (Filo Fuhuk) | 70 | Naha Kaik | 59 | Tomás Guterres | 50 |
| José Ole Leki | 29 | Naha Lirik | 40 | Tomás Soares | 49 |
| José Susu Nahak | 34 | Naha Mauk | 20 | Tomás Tilman A. | 39 |
| Julio Alves | 40 | Naha Rubik | 35 | Tui Saan | 17 |
| Kai Dokik | 40 | Napoledo | 43 | Vasco Gomes | 41 |
| Kai Fromok | 47 | Noegeria Amaral | 28 | Vitolimo Ribeiro | 54 |
| Kai Labu | 41 | Noema Baptista | 24 | Vitorino Monteiro | 23 |
| Kai Lirik | 45 | Nono Kai | 25 | Wai Dirik | 36 |
| Kai Mauk | - | Nono Kaik | 38 | Watu Bata | 50 |

Pembunuhan-pembunuhan lain di wilayah Kraras

530. Komisi juga mendapatkan keterangan mengenai sejumlah pembunuhan orang sipil lain di wilayah Kraras, termasuk yang terjadi di Mali Aba Ulu dan Kaken Kilat.⁵⁷⁵

531. Komisi mendapatkan keterangan bahwa pada 22 September, Hare Cae dan Celestino dos Anjos, istri dan ayah dari mantan komandan Ratih di Kraras, Virgílio dos Anjos (Ular Rheik), dibunuh oleh anggota-anggota Hansip di dekat Kaijun Laran, dan bahwa seorang laki-laki bernama Abel dibunuh di dekatnya.⁵⁷⁶ Seorang saksi mengatakan kepada Komisi bahwa Cipriano Pereira ditangkap di Kaijun Laran, ditahan di markas Kodim, dan selanjutnya hilang.⁵⁷⁷ Saksi lain mengatakan bahwa tentara Indonesia dan petugas polisi desa (Binpolda) menangkap suaminya, António Carada, dan empat orang temannya, Agostinho Amaral, Daniel Amaral, Cipriano Pereira, dan Serafin Soares, serta membawa mereka ke arah kota Viqueque. Tidak seorang pun dari mereka terlihat lagi.⁵⁷⁸

Tabel 23: Eksekusi dan penghilangan di wilayah Kraras, 1983, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|
| Susuki | 19 Sep. 1983 | Sukar Oan | - | - | hilang |
| Hare Cae (Alda) | 22 Sep. 1983 | Kaijun Laran | - | - | dibunuh |
| Celestino dos Anjos | 22 Sep. 1983 | Kaijun Laran | - | - | dibunuh |
| Abel | 22 Sep. 1983 | Kaijun Laran | - | - | dibunuh |
| Albino Soares | 17 Okt. 1983 | Lalerek Mutin | - | - | hilang |
| Bosi Modo | 17 Okt. 1983 | Lalerek Mutin | - | - | hilang |
| Daniel | 17 Okt. 1983 | Lalerek Mutin | - | - | hilang |
| Lacaros | 17 Okt. 1983 | Lalerek Mutin | - | - | hilang |
| Manuel | 17 Okt. 1983 | Lalerek Mutin | - | - | hilang |
| Toni Siku | 17 Okt. 1983 | Lalerek Mutin | - | - | hilang |
| Rubi Bere | 17 Okt. 1983 | Lalerek Mutin | - | - | hilang |
| Wai Bosi | 17 Okt. 1983 | Lalerek Mutin | - | - | hilang |
| Cipriano Pereira | 1983 | Viqueque | - | - | hilang |
| António Carado | 1983 | - | - | - | hilang |

Eksekusi di luar hukum dan penghilangan lain di kawasan timur (1983-1984)

Viqueque

532. Komisi memperoleh daftar orang yang dicurigai aktif dalam Resistansi yang disusun oleh para pejabat desa pada akhir 1983. Komisi juga mendapatkan bukti bahwa, berdasarkan daftar-daftar anggota GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan) tersebut, militer menjadikan sasaran orang-orang yang kemudian dieksekusi atau dihilangkan. Komisi memiliki daftar dari tujuh desa di Subdistrik Uato Carbau (Viqueque) dengan jumlah nama seluruhnya 182. Salah satunya adalah daftar yang ditandatangani oleh Francisco Pinto, kepala desa Bahatata pada 1983 yang berisi nama 13 mantan anggota “GPK”. Selain nama-nama, daftar tersebut memberikan keterangan mengenai umur, tahun menyerah, kedudukan ketika di hutan, pekerjaan saat itu, dan tempat tinggal saat itu.

533. Komisi memperoleh bukti memperkuat mengenai peran pasukan keamanan Indonesia dalam penghilangan orang-orang yang didaftar sebagai “GPK.” Misalnya, dalam satu dokumen militer bertanggal 19 April 1984, satu kelompok 11 tahanan dipindahkan dari Piton 12, satu unit Kopassus, ke Batalion 511 di Viqueque, dan kemudian ke Dili. Komisi mendapatkan sejumlah kesaksian yang menunjukkan bahwa 11 orang yang didaftar dalam dokumen tersebut semuanya hilang setelah diserahkan kepada Batalion 511.⁵⁷⁹ Seorang saksi mengatakan kepada Komisi:

Tanggal 19 April 1984, pukul 9 pagi, Batalion 511 membawa suami saya beserta 10 orang tahanan, antara lain: Ermenegildo da Conceição, Jeremias Xavier, Gaspar de Carvalho (kakek saya), Francisco Lebre Correia (suami saya). Ketika itu saya pergi mengunjungi suami saya dengan membawa makanan, seprei, dan tikar. Namun ketika saya sampai di sana, suami saya dan tahanan lainnya sudah berada di dalam mobil dengan keadaan mata dan tangan terikat...Kemudian saya bertanya kepada TNI: “Suami saya mau dibawa ke mana?” Katanya suami saya dibawa ke Viqueque untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, setelah itu dibebaskan kembali. Tetapi kenyataan tidak seperti yang diharapkan, pada tanggal itu juga suami saya dibawa entah ke mana dan sampai sekarang tidak kunjung tiba juga.’

534. Menurut satu kesaksian, orang-orang itu diperintahkan untuk mencari Falintil di hutan. Waktu itu salah satu dari mereka, Ricardo Madeira, melarikan diri. Ketika kelompok itu melapor kembali ke Piton 12, mereka diperintahkan mencari Ricardo dan membunuhnya. Ia dibunuh pada akhir Maret 1984 oleh teman-temannya.⁵⁸⁰

.....
* Pernyataan HRVD 06957; 07335; 07521; dan 06786. Empat nama itu semua disebut dalam “Daftar Nama Anggota Ex-GPK di Desa Bahatata Kecamatan Uatu-Carbau Tahun 1978,” ditandatangani oleh kepala desa Bahatata, Francisco Pinto, bertanggal 11 November 1983. Lihat juga Wawancara CAVR dengan Mateus Pinto, Uato Carbau, Viqueque, 5 Oktober 2003.

535. Komisi juga mendapatkan keterangan mengenai beberapa pembunuhan dan penghilangan lain di Distrik Viqueque. Pada 1983 komandan Hansip di Ossu menangkap Celestino dos Reis dan ia kemudian hilang.⁵⁸¹ 20 Maret 1984 Cipriano Uala ditangkap di Ossu oleh anggota-anggota Kodim, dibawa ke satu tempat bernama Leque Meta, dan dieksekusi.⁵⁸²

536. Pada 1983 António, Manuel, Miguel, José, dan seorang perempuan bernama Hare Nahak dilaporkan ditembak mati oleh Yonif 742 dan Batalion Marinir 503 di Uma Kiik, Viqueque.⁵⁸³ Oktober tahun itu, seorang laki-laki bernama António dilaporkan ditangkap dan dibunuh di Buicaren.⁵⁸⁴ 23 November 1983 lima laki-laki dilaporkan ditangkap oleh anggota-anggota Chandraça 7, dibawa ke Kodim di Viqueque, dan kemudian hilang.⁵⁸⁵ Dan pada atau sekitar 28 Maret 1983, dua orang laki-laki—Jeremias Soares Pinto dan Caetano de Fátima—disebutkan hilang dari Kodim di Viqueque.⁵⁸⁶

537. Komisi memperoleh berbagai laporan yang menyebutkan bahwa pada atau sekitar 21 Maret 1984, 16-18 orang hilang setelah dimasukkan dalam tahanan di pos Chandraça di Uaitame.⁵⁸⁷

538. Di Matahoi (Uatolari, Viqueque), laki-laki bernama Domingos dan Pedro diduga dibunuh oleh anggota-anggota Yonif 511.⁵⁸⁸ Di Macadiqui, juga wilayah Subdistrik Uatolari, seorang laki-laki bernama Julio da Silva dilaporkan telah dipaksa menjadi TBO oleh Batalion 406 dan kemudian hilang.⁵⁸⁹

539. Pada 1984, seorang pejuang Falintil yang tertangkap dilaporkan hilang dari markas Kodim di Viqueque.⁵⁹⁰ Pada Februari 1984, Calistro Soares, Benjamim, dan Paulo Gusmão ditangkap oleh anggota-anggota Kopassus, ditahan di markas Kodim di Viqueque, dan kemudian dieksekusi di Olobai.⁵⁹¹

Tabel 24: Orang-orang yang dieksekusi dan hilang di Viqueque, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tahun | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|--------------------|--------------|-----------|------|-----------------|------------|
| Celestino dos Reis | 1983 | Ossu | - | - | hilang |
| António | 1983 | Uma Kiik | - | - | dibunuh |
| Manuel | 1983 | Uma Kiik | - | - | dibunuh |
| Miguel | 1983 | Uma Kiik | - | - | dibunuh |
| José | 1983 | Uma Kiik | - | - | dibunuh |
| Hare Nahak | 1983 | Uma Kiik | - | - | dibunuh |
| Domingos | 1983? | Matahoi | - | - | dibunuh |
| Pedro | 1983? | Matahoi | - | - | dibunuh |
| Julio da Silva | 1983 | Macadiqui | 28 | - | hilang |
| Manuel Soares | 23 Nov. 1983 | Lugasa | - | RK | hilang |
| Manuel Soares | 23 Nov. 1983 | Lugasa | - | Sekretaris Desa | hilang |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|---|---|--------------|
| Mariano Meneses | 23 Nov. 1983 | Lugasa | - | - | hilang |
| Armando Rangel | 23 Nov. 1983 | Lugasa | - | - | hilang |
| Gregório da Cruz | 23 Nov. 1983 | Lugasa | - | - | hilang |
| Calistro | 11 Feb. 1984 | Haderai | - | - | dieksekusi |
| Benjamin M | 11 Feb. 1984 | Haderai | - | - | dieksekusi |
| Paulo Gusmão | 11 Feb. 1984 | Haderai | - | - | dieksekusi |
| Cipriano Uala | 20 Mar. 1984 | Ossu | - | - | dieksekusi |
| Jeremias S. Pinto | 28 Mar. 1984 | Kodim Viq. | - | - | hilang |
| Caetano de Fátima | 28 Mar. 1984 | Kodim Viq. | - | - | hilang |
| Mateus do Rosario | Mar. 1984 | Uaitame | - | - | hilang |
| Katorje | Mar. 1984 | Uaitame | - | - | hilang |
| Manuel | Mar. 1984 | Uaitame | - | - | hilang |
| Alberto | Mar. 1984 | Uaitame | - | - | hilang |
| Rui | Mar. 1984 | Uaitame | - | - | hilang |
| Paulo 1 | Mar. 1984 | Uaitame | - | - | hilang |
| Paulo 2 | Mar. 1984 | Uaitame | - | - | hilang |
| Caetano | Mar. 1984 | Uaitame | - | - | hilang |
| Angelina | Mar. 1984 | Uaitame | - | - | hilang |
| Adriano | Mar. 1984 | Uaitame | - | - | hilang |
| Lino | Mar. 1984 | Uaitame | - | - | hilang |
| Luis | Mar. 1984 | Uaitame | - | - | hilang |
| Afonso Pereira | Mar. 1984 | Uaitame | - | - | hilang |
| Ricardo Maderia | 31 Mar. 1984 | Uani Uma | - | - | dipukul mati |

Lautém

540. Selama gencatan senjata 1983 Fretilin/Falintil juga mengadakan hubungan dengan orang-orang Timor-Leste anggota Hansip dan pegawai pemerintah sipil di Subdistrik Iliomar, Lautém, dan satu pemberontakan Hansip dijadwalkan akan dilakukan 8 Agustus. Tetapi sebelum rencana itu dilaksanakan, anggota-anggota Hansip yang setia pada militer Indonesia membunuh dua orang anggota Resistansi, Amílcar Rodrigues dan Venancio Savio, dalam satu pertemuan.*

* Untuk uraian mengenai kejadiannya, lihat Profil Komunitas Cainliu, Ailebere, Iliomar I dan Iliomar II (semuanya Iliomar, Lautém); CAVR, Laporan Hasil Tim Penelitian Pemindahan Paksa dan Kelaparan di Subdistrik Iliomar, 27 Mei-4 Juni 2003; Pernyataan HRVD 03930 dan 04008; dan Ernest Chamberlain, *The Struggle in Iliomar: Resistance in Rural East Timor*, 2003, halaman 24.

541. Sekitar waktu yang sama ketika pemberontakan-pemberontakan terjadi di Kraras dan yang direncanakan akan dilakukan Iliomar terbongkar, Miguel dos Santos, *liurai* Mehara, mengorganisasikan dan memimpin pembelotan anggota-anggota Hansip di Desa Mehara (Tutualla, Lautém). Seorang saksi mengatakan kepada Komisi bahwa 33 orang anggota Hansip membelot dengan membawa senjata yang diambil dari militer dan kepolisian Indonesia, bersama dengan 40 orang sipil, termasuk sejumlah anak-anak.⁵⁹² António dos Santos mengatakan kepada Komisi:

Pada tahun 1982 banyak orang sudah mengetahui hubungan Raja Miguel dengan Xanana, termasuk pertemuan dengan Uskup Dom Martinho di sini [Mehara]. Banyak orang memberi informasi ke militer Indonesia mengenai kegiatan [Raja Miguel], sehingga sesudah pertemuan dengan Dom Martinho, Raja Miguel diteror, mau ditangkap. Sehingga 1983 dia melarikan diri...Raja Miguel lari ke hutan pada 9 Agustus...membawa beberapa orang Hansip...⁵⁹³

542. Komisi juga mendapatkan keterangan mengenai pemberontakan di Leuro, Subdistrik Lospalos, di mana sepuluh orang anggota Hansip membelot pada 8 Agustus 1983, dan di Serelau, Subdistrik Moro.⁵⁹⁴

543. Jawaban ABRI pada kejadian-kejadian tersebut sangat keras. Taktiknya meliputi pembersihan Hansip dan pemerintah sipil dari orang-orang yang kemungkinan bersimpati pada Falintil dan eksekusi orang-orang yang dicurigai anggota klandestin, kadang-kadang eksekusi ini dilakukan di depan umum, tetapi banyak orang sipil biasa juga menjadi korban tindakan pemberantasan yang dilancarkan selanjutnya.

544. Setelah pembunuhan Amílcar Rodrigues dan Venancio Savio di Iliomar, mayat mereka dibawa ke markas Koramil. Komandan Koramil memerintahkan Hansip untuk memanggil penduduk dengan membunyikan sebuah lonceng. Ketika penduduk datang, penangkapan dimulai. Yang ditangkap termasuk kepala semua enam desa di subdistrik tersebut, yang ambil bagian dalam kontak dengan Fretilin ketika gencatan senjata berlaku.⁵⁹⁵

545. Di Iliomar, tanggapan militer sangat kejam, termasuk penangkapan, pengiriman sekitar 300 keluarga dari subdistrik ini ke Pulau Ataúro, penganiayaan dan penyiksaan, pembunuhan dan eksekusi di depan umum. Penindasan paling keras di Desa Iliomar I, Cainliu, Fuat, dan Ailebere, walaupun semua desa di subdistrik itu terkena.⁵⁹⁶ Meskipun pejabat-pejabat desa dan Hansip serta Ratih termasuk yang menjadi sasaran utama penindasan, penangkapan meluas melebihi kelompok-kelompok ini, dan seluruh penduduk menderita karena pemberlakuan kembali pembatasan gerak mereka, yang membuat lahan pertanian tidak bisa diolah dan memaksa penduduk mempertahankan hidup dengan mengais-ngais mencari umbi-umbian dan daun-daunan. Pada 1983-1984, 97 orang dilaporkan meninggal dunia karena kelaparan dan sakit.⁵⁹⁷ Seperti di masa awal, ada kasus-kasus orang yang ditembak mati ketika sedang keluar mencari bahan makanan.⁵⁹⁸

546. Banyak anggota Hansip dan pegawai pemerintah sipil ditahan pada paruh kedua Oktober. Di antara mereka adalah tiga orang yang bekerja pada pemerintah setempat, termasuk seorang kepala aldeia Leilor di Desa Ailebere, Francisco Serpa Rosa, dan orang keempat Manuel da Costa, seorang tukang kayu. Empat orang itu semuanya disebut diangkat untuk menjadi penghubung antara ABRI dan Falintil pada waktu berlaku gencatan senjata.⁵⁹⁹ Setelah empat orang tersebut disiksa parah oleh Hansip yang bertugas di Koramil Iliomar, Francisco Serpa Rosa dan Manuel da Costa diserahkan kepada pos Batalion 315 di Hiilari, dari sana mereka dibawa keluar dan dibunuh. November 1983 anggota Hansip Carlos da Costa, Luis Lopes, dan Ernesto Madeira dibunuh oleh anggota-anggota Hansip lain di Diriloflo (Iliomar I, Iliomar).⁶⁰⁰ Mungkin pada bulan yang sama seorang anggota Hansip lain, Filomeno da Gama, yang juga bekerja pada kantor kecamatan, dieksekusi, tempatnya disebutkan di lapangan sepak bola Iliomar di Iliomar.⁶⁰¹ Ini disusul dengan penangkapan, pembebasan, dan penangkapan kembali beberapa orang, termasuk perempuan yang dianiaya. Pada 3 Desember, di hadapan komandan Koramil dan seorang perwira Kopassus, kepala desa memerintahkan enam perempuan tahanan untuk memukul Belmonte Jerónimo, seorang wakil kepala desa, dengan sebatang kayu sampai mati. Salah seorang dari para perempuan itu mengatakan kepada Komisi:

Dua orang Hansip datang menangkap saya dan dibawa ke Koramil Iliomar. Saya melihat seorang laki-laki yang bernama Belmonte sudah dipukul, disiksa, dan jatuh pingsan. [Pada waktu itu] kepala desa yang bernama M306 dan seorang Nanggala yang bernama M307 sedang berdiri di tempat di mana Belmonte jatuh. M306 memanggil saya, "Kamu berdiri di sini." Lalu memberikan kayu kepada saya. Berikutnya ia memanggil M308 dan M309. Mereka berdua juga diberi kayu. Setelah itu [ia] menyuruh kami memukul Belmonte hingga meninggal dunia.⁶⁰²

547. Tidak lama kemudian, kemungkinan hari berikutnya, Fernando dos Santos dibunuh oleh seorang anggota Hansip di Uatamatar (Ailebere, Iliomar), dan Joaquim dos Santos dibunuh oleh seorang anggota Hansip lain di Desa Titililo.⁶⁰³ 9 Desember, dua laki-laki lagi dieksekusi. Seorang deponen mengatakan kepada Komisi:

Kedua teman saya yang bernama Humberto dan Marcelino diinvestigasi di desa Cainliu. Dalam investigasi itu keduanya menyebut nama saya (Lourenço) bahwa saya terlibat di dalam organisasi klandestin. Lalu kedua teman saya Humberto dan Marcelino dibawa oleh Hansip ke Cainalor, wilayah Cainliu, lalu dibunuh.⁶⁰⁴

548. Pasukan dari Koramil dan Hansip juga memerintahkan penduduk desa di Cainliu untuk memukul Margarida da Costa dan suaminya, Paulo Fernandes, sampai mati. Seorang deponen mengatakan kepada Komisi:

.....
* Pernyataan HRVD 04393 dan Profil Komunitas Ailebere (Iliomar, Lautém). Dua lainnya, Americo Jerónimo dan Fernando da Costa, dibawa ke Dili untuk kemudian diadili di sana.

Pada tahun 1983...M310 menangkap Margarida da Costa dan suaminya Paulo Fernandes dan ditahan di kantor desa Cainliu di Iliomar. Selama tujuh hari, pakaiannya mereka ditanggalkan dan hanya memakai celana dalamnya saja. M310 kemudian pergi memberitahukan kepada masyarakat desa Cainliu untuk menonton kedua korban itu. Sesudah ditonton oleh masyarakat Desa Cainliu, barulah mereka membawa Paulo Fernandes dan istrinya Margarida da Costa menuju ke Suamutur di wilayah Cainliu untuk dibunuh. Kuburan mereka telah digali sehari sebelumnya. Mereka dibunuh dengan dipukul pada tengkuk. Margarida da Costa jatuh ke dalam liang kubur yang telah disediakan sebelumnya. Begitu pula suaminya, Paulo Fernandes. Masyarakat desa Cainliu disuruh oleh M310, M311, dan M312 untuk menyaksikan kejadian itu...⁶⁰⁵

549. Segera sesudah pembunuhan Margarida da Costa dan Paulo Fernandes, bayi mereka yang berusia tujuh bulan, Carsolita, meninggal dunia karena kekurangan susu.⁶⁰⁶

550. Sekitar waktu yang sama Koramil Iliomar dan Hansip juga memaksa penduduk sipil di Cainliu untuk membunuh Martinho, Venancio, dan Americo di depan umum.⁶⁰⁷ Carlos Correia, Joaquim Sanches, José Anunciação, dan António Jerónimo dipukuli sampai mati di depan umum di Dirilofu (Iliomar I, Iliomar).⁶⁰⁸

Tabel 25: Orang-orang yang dieksekusi di Iliomar, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|----------------------|-------------|--------------------|------|-------------------|-----------------|
| Filomeno da Gama | 9 Sep. 1983 | Iliomar | 26 | Hansip | dibunuh |
| Carlos da Costa | Nov. 1983 | Dirilofu | 27 | Hansip | dibunuh |
| Luis Lopes | Nov. 1983 | Dirilofu | 24 | Hansip | dibunuh |
| Ernesto Madeira | Nov. 1983 | Dirilofu | 23? | Hansip | dibunuh |
| Manuel da Costa | Nov. 1983 | Larimata, Ailebere | - | - | dibunuh |
| Francisco Serpa Rosa | Nov. 1983 | Larimata, Ailebere | - | - | dibunuh |
| Belmonte Jeronimo | 3 Des. 1983 | Iliomar | - | Wakil Kepala Desa | pemukulan fatal |
| Fernando dos Santos | 4 Des. 1983 | Tirililo | 25 | - | ditembak |
| Joaquim dos Santos | 4 Des. 1983 | Tirililo | 20 | - | ditembak |
| Marcelino Hornay | 9 Des. 1983 | Cainliu | 22 | - | ditembak |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|----|-----------------|------------------------|
| Margarida da Costa | 14 Des. 1983 | Cainliu | 24 | - | eksekusi di depan umum |
| Paulo Fernandes | 14 Des. 1983 | Cainliu | 37 | - | eksekusi di depan umum |
| Martinho Monteiro | 22 Des. 1983 | Cainliu | - | Hansip | eksekusi di depan umum |
| Humberto da Cruz | 22 Des. 1983 | Cainliu | - | Hansip | dieksekusi |
| Venancio da Costa | 22 Des. 1983 | Cainliu | 24 | - | eksekusi di depan umum |
| Americo Cipriano | 22 Des. 1983 | Cainliu | 25 | - | eksekusi di depan umum |
| Carlos Correia | 22 Des. 1983 | Dirilofu | 35 | Sekre. Fretilin | eksekusi di depan umum |
| Joaquim Sanches | 22 Des. 1983 | Dirilofu | 36 | Katekis | eksekusi di depan umum |
| José Anunciação | 22 Des. 1983 | Dirilofu | 20 | - | eksekusi di depan umum |
| António Jerónimo | 22 Des. 1983 | Dirilofu | - | - | eksekusi di depan umum |
| Claudio Ferreira | Des. 1983 | Iliomar II | - | - | hilang |
| Amílcar dos Santos | 1983 | Iliomar I | 34 | *** | |
| Ernesto dos Santos | 1983 | Iliomar I | 35 | *** | |
| Mateus Pinto | 1983 | Iliomar I | 48 | *** | |
| Alfredo Pinto | 1983 | Iliomar I | 51 | *** | |
| Joao Ruas | 1983 | Iliomar I | 30 | *** | |
| Raimundo Pinto | 1983 | Iliomar I | 56 | *** | |
| António da Costa | 1983 | Iliomar I | 34 | *** | |

551. Di Mehara, dari mana Hansip melakukan pembelotan di bawah pimpinan Miguel dos Santos, juga terjadi pembalasan besar-besaran. Pasukan tentara Indonesia dilaporkan membunuh João Albuquerque pada akhir Agustus 1983.⁶⁰⁹ Sejumlah kesatuan militer dikirimkan ke desa ini, termasuk Sater 515, Batalion 641, Kopassus, dan Batalion Linud 100. Mereka melakukan penangkapan, penyiksaan, kekerasan seksual, serta pembunuhan dan penghilangan. Orang-orang dari aldeia Loikere dan aldeia Porlamano dipindahkan ke sekolah dasar dan gereja di Mehara di mana mereka dikurung selama beberapa minggu.⁶¹⁰

552. Batalion 641 dan Batalion Linud 100 dilaporkan melakukan banyak eksekusi dan penghilangan terhadap penduduk desa. Linud 100 dilaporkan melakukan eksekusi terhadap satu orang pada 7 Oktober,⁶¹¹ satu orang lain pada 15 November dan 20 November,⁶¹² serta dua orang lagi pada 25 November.⁶¹³ Sabina das Dores menyampaikan kepada Komisi mengenai salah satu dari eksekusi tersebut:

Pada tanggal 14 November 1983, saya ditangkap dan dibawa ke pos pasukan Yonif 641 dan Linud 100 di Mehara. Sesampainya di sana saya disiksa, dengan dibakar dengan puntung rokok dan lain-lain. Pada hari itu juga terjadi pembunuhan terhadap Mateus. Mayatnya dibuang. Hingga sekarang kami tidak tahu tempat penguburan mayatnya.⁶¹⁴

553. Di Poros (Mehara, Tutuala, Lautém), pada akhir 1983, tentara Indonesia melakukan eksekusi di depan umum dan sejumlah penghilangan orang setelah dibawa ke tempat penahanan.⁶¹⁵ Dalam Oktober, tujuh orang, termasuk seorang anggota Hansip, dibawa ke Kodim dan Batalion Linud 100 di Lospalos dan kemudian hilang.⁶¹⁶ 13 November 1983 lima orang—Karasu Malay, Frederico do Carmo, Francisco Cristovão, Gilberto, dan Manuel de Jesus—dieksekusi di depan umum satu demi satu di gua Macakuro di Poros, oleh anggota-anggota Batalion 641. Pembunuhan ini disebutkan merupakan pembalasan atas pembunuhan terhadap seorang TBO oleh Falintil.⁶¹⁷ Pada 25 Desember 1983, tiga orang laki-laki, Oscar Lopes, Alvaro Gomes, dan Francisco Lopes, ditangkap di Poros oleh anggota-anggota Batalion 641, dibawa ke markas Kodim di Lospalos dan kemudian hilang. Istri Oscar Lopes, Gracilda Guimarães, berbicara di hadapan Audiensi Publik Nasional Komisi mengenai penahanan dan penghilangan suaminya.*

Suami saya adalah guru sekolah dasar di Poros dan pemimpin kelompok resistansi klandestin bernama Loriku Assuwain. Tahun 1983 satu kelompok Hansip dari Poros bergabung dengan Falintil di hutan. Beberapa minggu kemudian komandan militer Tutuala memaksa suami saya ikut operasi Pagar Betis selama satu bulan mencari anggota-anggota Hansip yang lari. Tanggal 13 November 1983 Hansip bersama dengan ABRI 641 di Poros datang ke rumah menangkap suami saya. Beberapa hari kemudian ia dibebaskan. [Setelah ditahan selama tiga malam] suami saya...dan beberapa temannya dibawa ke Kodim 1629 di Lospalos. Sampai hari ini suami saya dan dua temannya tidak kembali. Teman satu lagi dibebaskan dan kembali ke Poros.⁶¹⁸

554. Komisi memperoleh keterangan mengenai eksekusi atau penghilangan orang-orang berikut ini di Mehara pada akhir 1983 dan awal 1984:

* Gracilda Guimarães juga dimasukkan tahanan dan menjadi korban serangan seksual. Ia bersama anaknya yang masih kecil ketika ditahan. Bayinya menjadi sakit malaria (lihat kesaksian lengkap dalam Bab 7.7: Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual).

Tabel 26: Orang-orang yang dieksekusi di Mehara, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|------------------|--------------------|
| João Albuquerque | Agu. 1983 | Mehara | 30 | petani | ditembak Camat |
| Jorge Nascimento | 7 Okt. 1983 | Loikere | ~50 | petani | dibakarsampai mati |
| Mateus Gonzaga | 15 Nov.1983 | Loikere | ~63 | - | dieksekusi |
| Orlando | 20 Nov. 1983 | Tolofai | - | - | ditembak |
| Gaspar Nunes | 25 Nov. 1983 | Porlamano | 37 | - | dibakarsampai mati |
| José Manuel Inacio | 25 Nov. 1983 | Loikere | 42 | - | dibakarsampai mati |
| Alexandre Correia | 1983 | Porlamano | - | - | ditembak |
| Ernesto da Americo | 1983 | Loikere | - | - | ditembak |
| Francisco Lopes | Okt. 1983 | Poros | 29 | ketua RT | ditembak |
| Cristovão Lopes | Okt. 1983 | Poros | 30 | - | hilang |
| Constantino da Costa | Okt. 1983 | Poros | 24 | - | hilang |
| Damião Lopes | Okt. 1983 | Poros | 24 | Hansip | hilang |
| Loureiro | Okt. 1983 | Poros | 28 | - | hilang |
| Alvaro dos Santos | Okt. 1983 | Poros | 31 | - | hilang |
| Antonio Soares | Okt. 1983 | Poros | 19 | - | ditembak |
| Karasu Malay | 13 Nov. 1983 | Poros | 50 | - | dieksekusi |
| Francisco Cristovão | 13 Nov. 1983 | Poros | 30 | - | dieksekusi |
| Frederico | 13 Nov. 1983 | Poros | 32 | - | dieksekusi |
| Gilberto | 13 Nov. 1983 | Poros | 28 | - | dieksekusi |
| Manuel de Jesus | 13 Nov. 1983 | Poros | 34 | - | dieksekusi |
| Oscar Lopes | 7 Jan. 1984 | Poros | 25 | Guru | hilang |
| Alvaro Gomes | 7 Jan. 1984 | Poros | 32 | - | hilang |
| Mateus Pedro | 11 Jan. 1984 | Poros | 23 | Komandan Hansip | hilang |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|-------|----|---------|--------|
| Raul dos Santos | 11 Jan. 1984 | Poros | - | Hansip | hilang |
| Amancio | 11 Jan. 1984 | Poros | 18 | Pelajar | hilang |
| Joaquim | 11 Jan. 1984 | Poros | 17 | Pelajar | hilang |
| Olinda | 11 Jan. 1984 | Poros | 22 | - | hilang |
| Ermelinda | 11 Jan. 1984 | Poros | 22 | - | hilang |

555. Pemberantasan meluas ke tempat-tempat di Lautém yang tidak terjadi pemberontakan. Anggota-anggota Hansip/Ratih dan pegawai pemerintah sipil, orang-orang yang dicurigai menjadi anggota jaringan bawahanah, dan keluarga anggota Resistansi, termasuk terutama yang baru lari ke hutan, menjadi sasaran khusus.

556. Misalnya, pada 28 Agustus 1983, anggota-anggota Yonif 745 menangkap Paulo Marques, seorang berusia 24 tahun anggota Hansip di Home, dekat Lospalos, dan kemudian mengeksekusinya. Pada 5 September, personel Kodim menangkap Nicolau Flores, seorang anggota Ratih di Moro dan mengeksekusinya beberapa hari kemudian. Pada awal Januari seorang anggota Ratih lain bernama Tiago Bandeira das Dors ditangkap dan disiksa. Pada akhir Januari 1984, di Moro, seorang anggota Ratih bernama Alfredo Coutinho ditangkap dan disiksa. Istrinya, yang secara teratur membawakan makanan untuknya, melaporkan bahwa suaminya hilang dari tahanan pada April.⁶¹⁹

557. Di Lore (Lospalos, Lautém) Agustus 1983, militer Indonesia menanggapi pemberontakan Hansip dengan menangkap sejumlah perempuan yang dicurigai punya sanak-saudara di dalam Resistansi. Beberapa lama kemudian, Falintil menyerang pasukan Indonesia di wilayah Lore. Batalion 641 membalas dengan menembakkan mortir ke kamp pemukiman Maluro (Lore I, Lospalos), yang membunuh sembilan orang yang berumur antara tiga dan 50 tahun. Pada November 1983 empat orang ditangkap, salah satunya dieksekusi.⁶²⁰ Pada akhir 1983 anggota-anggota Kopassus menangkap enam laki-laki. Mayat salah seorang dari mereka kemudian diarak keliling desa; lima orang lainnya dikatakan hilang. Menurut Raul da Costa Pite:

Sejak itu [penyerangan Falintil], Komando yang bernama M313 bersama M314 membawa saya bersama teman-teman saya ke pos Komando...Setibanya di pos tersebut masing-masing kami diikat pada kedua tangan lalu dibiarkan di bawah terik matahari, kemudian para anggota Komando melempar kami dengan batu.

Pada besok pagi Komando mengumpulkan seluruh warga Maluro untuk mengikuti apel pagi. Pada saat itu mayat António dibawa oleh penduduk Maluro kemudian menguburkannya. Tetapi saya tidak tahu keberadaan yang lain hingga saat ini...⁶²¹

558. Dua orang lain, Amando Castanheira dan Jeferino, juga dilaporkan dibunuh oleh “Komando” (satu istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut anggota pasukan khusus Kopassandha/Kopassus) dan Hansip setempat di Lore pada 1983.⁶²² Pada Februari 1984, seorang laki-laki dieksekusi dan seorang anggota Ratih ditangkap. Saksi IA mengatakan kepada Komisi bahwa pada 1984 anggota-anggota Kopassus menangkap lima orang laki-laki di Maluro dan mengeksekusi mereka.⁶²³ Seorang saksi lain menyampaikan kepada Komisi bahwa anggota-anggota Hansip membunuh Mario Nogueira di Maluro pada 1984.⁶²⁴

Tabel 27: Orang-orang yang dibunuh di Lore, 1983-1984, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|--------------------|--------------|-------------------|------|-----------|-----------------|
| J. Levano | 4 Nov. 1983 | Maluro, Lore I | 40 | - | tembakan mortir |
| Ana Moe | 4 Nov. 1983 | Maluro, Lore I | 18 | - | tembakan mortir |
| Halu Palinu | 4 Nov. 1983 | Maluro, Lore I | 12 | - | tembakan mortir |
| Kaia Moe | 4 Nov. 1983 | Maluro, Lore I | 20 | - | tembakan mortir |
| Paia Moe | 4 Nov. 1983 | Maluro, Lore I | 15 | - | tembakan mortir |
| Jacinta Ximenes | 4 Nov. 1983 | Maluro, Lore I | 26 | - | tembakan mortir |
| Celia Ximenes | 4 Nov. 1983 | Maluro, Lore I | 3 | - | tembakan mortir |
| J. Romono | 4 Nov. 1983 | Maluro, Lore I | 16 | - | tembakan mortir |
| Kulu Leve | 4 Nov. 1983 | Maluro, Lore I | 50 | - | tembakan mortir |
| Amand. Castanheira | 17 Nov. 1983 | Horo Lata, Lore I | 28 | Guru | eksekusi |
| Jaime Castelo | 6 Feb. 1984 | Lore 2 | 23 | Montir | eksekusi |
| António Pinto | 1984 | Maluro, Lore I | - | - | dibunuh |
| Luis Bianco | 1984 | Maluro, Lore I | - | - | dibunuh |
| Ratumkia | 1984 | Maluro, Lore I | - | - | dibunuh |
| Mauromonu | 1984 | Maluro, Lore I | - | - | dibunuh |
| Letilere | 1984 | Maluro, Lore I | - | - | dibunuh |
| Mario Nogueira | 1984 | Maluro, Lore I | - | - | dibunuh |

559. Komisi juga menerima keterangan bahwa banyak orang dibunuh atau dihilangkan dari markas Kodim di Lautém pada 1983. Ini mencakup sekelompok empat orang yang ditahan di markas Kodim yang kemudian dieksekusi,⁶²⁵ sekelompok enam orang yang dibunuh atau dihilangkan,⁶²⁶ satu orang laki-laki bernama Armindo da Silva yang dihilangkan,⁶²⁷ seorang laki-laki bernama Damião Dias Martins yang ditahan dan dihilangkan,⁶²⁸ dan seorang laki-laki bernama José dari Com yang dihilangkan.⁶²⁹ Pada 1984, Pedro Cardoso, Gabriel Correia, dan António Oliveira dikatakan dihilangkan dari Kodim di Lospalos.⁶³⁰ Tiga orang lagi—António, Gabriel, dan Pedro—dikatakan telah ditahan di Kodim di Lospalos dan kemudian dieksekusi pada atau sekitar 28 Juli 1984.⁶³¹ Terakhir, dalam Desember 1984, seorang laki-laki bernama Teodoro disebut dibunuh oleh anggota-anggota Yonif 131 di desa Serlau (Lospalos, Lautém).⁶³²

Tabel 28: Orang-orang yang dieksekusi atau hilang di Lospalos, 1983, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|---------------------|--------------|----------------|------|-----------|--------------------|
| José Monteiro | 1983 | - | - | - | dieksekusi |
| Sebastião | 1983 | - | - | - | dieksekusi |
| Raimundo | 1983 | - | - | - | dieksekusi |
| Risantula | 1983 | - | - | - | dieksekusi |
| Armindo da Silva | 1983 | - | - | - | hilang |
| Damião Dias Martins | Sep. 1983 | Kerana | - | - | hilang |
| António de Oliveira | 14 Okt. 1983 | - | - | - | hilang |
| Pedro dos Santos | 14 Okt. 1983 | - | - | - | hilang |
| Mário Pinto | 14 Okt. 1983 | - | - | - | hilang |
| Orlando Mendes | 14 Okt. 1983 | - | - | - | hilang |
| José Eurico | 14 Okt. 1983 | - | - | - | hilang |
| Antonio da Silva | 14 Okt. 1983 | - | - | - | hilang |
| Fernão F. Gusmão | Feb. 1984 | - | - | - | suntikan mematikan |
| António | 28 Juli 1984 | Kodim Lospalos | - | - | dibunuh |
| Gabriel | 28 Juli 1984 | Kodim Lospalos | - | - | dibunuh |
| Pedro | 28 Juli 1984 | Kodim Lospalos | - | - | dibunuh |

560. Di Fuiloro, seorang laki-laki bernama Fernando da Conceição dibunuh oleh seorang perwira Kopassandha pada 1983.⁶³³ Juga di Fuiloro, seorang laki-laki bernama Agostinho dilaporkan dibunuh oleh pasukan Nanggala pada 25 Agustus 1984.⁶³⁴

561. Di Desa Raça, Luis Silveira, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, ditangkap dan dibawa ke markas Kodim di Lospalos di mana ia disiksa dan kemudian hilang pada atau sekitar 4 Desember 1983. Seorang deponen mengatakan kepada Komisi:

*Tanggal 20 September 1983, Babinsa M315, Polisi M316, dan seorang anggota TNI masuk ke rumah Luis Silveiro tanpa izin dan mengambil segala dokumen dan kaset yang berkaitan dengan klandestin. Setelah beberapa jam, seorang anggota Polisi Militer dan lima orang Hansip datang menangkap Luis. Pada saat ditangkap, para pelaku mengatakan kepada istri Luis yang bernama Casilda Serra bahwa Luis akan dibawa pergi untuk belajar...Lalu Luis dibawa ke Kodim Lospalos dan dimasukkan ke dalam sel. Namun setelah satu bulan, sel yang ditempati korban Luis kosong. Luis hilang hingga sekarang.*⁶³⁵

Eksekusi di depan umum di Muapitine

Dalam satu insiden yang istimewa kejam di Muapitine (Lospalos, Lautém) pada 1983, tentara Indonesia menyuruh penduduk desa membunuh penduduk desa yang lain yang dicurigai bersimpati pada Falintil.⁶³⁶ Keterangan berikut diberikan oleh Mariana Marques, istri salah seorang korban, pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai pembantaian:

Pada 25 November 1983, tiga anggota ABRI datang menangkap suami saya, Angelo da Costa, bersama dua temannya: Lino Xavier dan Alvaro Pereira. ABRI juga menangkap Alberto, José Vicente, Gilberto, Leonel Oliveira, Alarico, dan José Vicente. Suami saya ditangkap karena dia menjadi Responsável Principal [Penanggungjawab Utama Resistansi] di desa Muapitine, sedangkan Lino Xavier adalah wakil Responsável Principal. Alvaro Pereira adalah anggota Ratih yang sering membantu memberikan peluru kepada Fretilin [sic, Falintil]. Pada 6 Desember 1983, ABRI melepaskan Gilberto, Alarico, dan José Vicente dari tahanan Kodim 1629 Lospalos. Keesokan harinya, 7 Desember 1983 kami mendengar pengumuman dari kepala desa Muapitine, bahwa besok pagi semua warga desa Muapitine...harus berkumpul di kantor desa untuk menunggu komandan ABRI yang berpangkat kolonel.

Kira-kira pukul enam pagi masyarakat Muapitine telah berkumpul di kantor desa untuk menyambut kedatangan petinggi militer itu dengan tarian tebe-tebe. Tepat pukul tujuh pagi, datang rombongan Komandan Kodim 1629 bersama Bupati Lautém Claudio Vieira bersama suami saya, Angelo, dan empat temannya yaitu Lino Xavier, Alvaro Pereira, Alberto, dan Leonel Oliveira.

Setibanya di kantor desa Muapitine, Komandan Kodim dan Bupati Lautém meletakkan tiga botol tuak di atas meja dan kemudian menuangkannya di lima gelas. Setelah itu mereka memanggil suamiku dan empat temannya untuk minum tuak yang telah disediakan. Setelah itu Bupati berdiri dan mengatakan dalam bahasa Fataluku bahwa suami saya bersama empat temannya akan membunuh dirinya sendiri karena mereka telah melakukan kesalahan.

Ternyata mereka kemudian memanggil suami saya dan memerintahkan kepala desa Muapitine Julio untuk membunuh suami saya. Julio memegang sangkur dan mendekati suami saya dan berkata, "Angelo, angkat kepalamu karena aku akan memotong lehermu." Mendengar permintaan Julio, suami saya mengangkat kepalanya dan Julia segera memenggal lehernya dengan sangkur, sehingga suami saya jatuh tersungkur meskipun dia masih bernapas. Setelah itu, mereka memanggil Lino Xavier dan memerintahkan Armando untuk membunuhnya... Armando langsung memotong tulang rusuk Lino, tapi Lino tidak meninggal. Akhirnya Armando memerintahkan kepada penduduk yang hadir untuk memotong-motong Lino. Dengan perasaan takut penduduk yang hadir pun melakukannya sampai Lino meninggal.

Setelah itu mereka membawa Leonel Oliveira. Aleixo yang bertindak sebagai algojo, dengan menusukkan sangkur pada tulang rusuknya hingga meninggal. Kemudian mereka juga membawa Alberto dan Verissimo yang membunuhnya dengan menusukkan pada tubuhnya. Setelah itu mereka membawa Alvaro, yang menangis sambil berkata, "Apa dosa yang telah saya lakukan sehingga kalian akan membunuh saya di depan penduduk?" Tapi mereka tidak peduli dan kepala desa Muapitine Julio membunuh Alvaro atas perintah pihak yang berkuasa.

Sesudah lima tahanan dieksekusi, Bupati Lautém Claudio Vieira memberi perintah kepada masyarakat di desa Muapitine untuk membawa lima orang itu ke tempat asal masing-masing untuk dikuburkan. [Namun, suami saya] Angelo da Costa belum meninggal. Seorang Hansip dari Kodim, Victor, mendapat perintah untuk menusuk suami saya. Victor menusuk tubuh suami saya dengan sangkur tapi Angelo masih belum meninggal. Saya dan masyarakat dari Kampung Puakelu membawa suami saya ke Kampung Puakelu. Sampai di Kampung Puakelu ternyata suami saya masih bernapas. Sampai pukul lima sore mereka belum menguburkannya karena ia masih hidup.

Seorang anggota Batalion 641 memerintahkan mereka untuk menguburkan suami saya. Namun suami saya berkata: “Mengapa aku dikuburkan, padahal aku masih hidup?” Pada saat itu ada seorang anggota Batalion 641 yang juga guru agama menyuruh saya untuk melepaskan baju suami saya, membersihkan darahnya, dan mengobati luka-lukanya.

Suami saya minta kepada saya untuk menghadap Komandan Pos 641 agar dia tidak dikuburkan. Saya pergi ke Pos 641 dan menyampaikan pesan suami saya. Komandan Pos meminta saya untuk menunggu karena dia harus melaporkan keadaan Angelo kepada Bupati melalui radio Rakal di Lospalos. Ternyata Bupati tetap memerintahkan agar Angelo dikuburkan. “Meskipun hanya sebelah tangannya yang dipotong, kalau Bupati telah memerintahkan maka dia harus dikuburkan,” demikian Komandan Pos itu menyampaikan pesan Bupati Lautém itu kepada saya.

Dalam penjagaan dua anggota Batalion 641, suami saya harus tetap dikuburkan. Setelah suamiku dimasukkan ke dalam lubang yang dalamnya kira-kira setengah meter, dia mengangkat tangannya keluar dan berkata begini: “Ciumlah tanganku. Dan pergilah untuk menjaga kedua anak kita, karena aku tidak ingin tidak punya keturunan.” Mendengar kata-kata terakhir dari suami saya, saya mendekat dan mencium tangannya. Setelah itu anggota Batalion 641 mengantarkan saya pulang ke rumah. Suami saya dikuburkan hidup-hidup tepat pada pukul enam sore di Kampung Puakelu.⁶³⁷

562. Komisi menyusun keterangan berikut ini mengenai umur dan pekerjaan lima orang laki-laki yang dieksekusi di Muapitine.

Tabel 29: Orang-orang yang dieksekusi di Muapitine, Desember 1983, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|--------------------|-------------|-----------|------|------------|------------------------|
| Angelo da Costa | 7 Des. 1983 | Malahara | 29 | Juru tulis | eksekusi di depan umum |
| Alvaro Freitas | 7 Des. 1983 | Muapitine | 30 | Ratih | eksekusi di depan umum |
| Lino Xavier | 7 Des. 1983 | Pefitu | 30 | Ketua RT | eksekusi di depan umum |
| Alberto dos Santos | 7 Des. 1983 | Vailoro | 31 | WaKades | eksekusi di depan umum |
| Lionel Oliveira | 7 Des. 1983 | Muapitine | 36 | - | eksekusi di depan umum |

563. Pada Maret 1984, sejumlah besar orang sipil, termasuk anggota-anggota Ratih, ditangkap di Luro oleh personel Kopassus. Beberapa dari mereka dieksekusi atau kemudian hilang.* Komisi juga memperoleh satu laporan yang menyebutkan bahwa pada 1984 anggota-anggota Batalion 315 membunuh seorang laki-laki bernama Felix da Costa di Lakawa⁶³⁸ dan Luis Adelaida ditangkap dan kemudian hilang.⁶³⁹

Tabel 30: Orang-orang yang dieksekusi/hilang dari kecamatan Luro, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|-------------------|-------------|--------|------|---------------|--------------|
| Ilifai [Elifahij] | 3 Mar. 1984 | Luro | - | - | ditembak |
| João Freitas | 3 Mar. 1984 | Luro | 28 | - | dieksekusi |
| Luis Ramos | 3 Mar. 1984 | Luro | - | <i>Liurai</i> | mati disiksa |
| Felix da Costa | 1984 | Lakawa | - | - | ditembak |
| Luis Adelaida | 1984 | Luro | - | - | hilang |

564. Walaupun pembunuhan-pembunuhan pertama di Lautém terjadi pada akhir Agustus dan awal September, kebanyakan kasus ini terjadi dalam tiga bulan terakhir tahun 1983, yang setelah itu terjadi penurunan tajam jumlah eksekusi di luar hukum dan penghilangan orang sipil.

Tabel 31: Pelanggaran mematikan dan penghilangan di Lautém, Agustus 1983 - Maret 1984, yang dilaporkan kepada CAVR

| Tempat | Agu. | Sep. | Okt. | Nov. | Des. | Jan. | Feb. | Mar. | bulan? | Total |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
| Mehara | 1 | - | 8 | 9 | - | 8 | - | - | 2 | 28 |
| Moro | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Home | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Fuiloro | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Raça | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Muapitine | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Lospalos | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | 8 | 16 |
| Lore | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | 11 | 22 |
| Iliomar | - | 1 | - | 3 | 5 | - | - | - | 9 | 28 |
| Luro | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Total | 2 | 3 | 14 | 22 | 21 | 9 | 2 | 3 | 35 | 1116 |

* Pernyataan HRVD 02777; 02796; 02797; lihat pula Doc No. 4/Ag/84, submisi kepada CAVR dari Anthony Goldstone yang melaporkan penghilangan sejumlah orang yang tampaknya ditahan di Dili tetapi kemudian dibebaskan.

Baucau

565. Komisi menerima informasi mengenai pembunuhan di luar hukum dan penghilangan terhadap sekurangnya 27 orang di Distrik Baucau pada 1983-1984. Dari 27 orang yang mati atau hilang yang diketahui Komisi, hanya delapan kasus yang tidak melibatkan penahanan sebelum pelanggaran fatal. Angka ini tidak termasuk paling tidak 20 orang dari Baucau yang dibawa ke Dili dulu dan Kupang, di mana mereka dibunuh atau lenyap. Namun demikian meskipun orang-orang ini dihitung dalam jumlah total pembunuhan di luar hukum dan penghilangan yang terjadi di Distrik Baucau pada 1983-84, Komisi percaya bahwa angka total seharusnya jauh lebih tinggi.

566. Komisi menerima informasi bahwa di Ossoala (Vemasse) sedikitnya ada sepuluh orang yang ditahan oleh anggota-anggota Hansip lokal yang tergabung dalam unit paramiliter yang disebut Tim Lorico, pada September 1983 dan lenyap.⁶⁴⁰ Francisco Sebastiao Gomes mengatakan kepada Komisi:

Pada 22 September 1983, Andre Gusmão ditangkap oleh militer Indonesia di kantor desa Ossoala bersama keponakannya bernama Alexandre Gomes pada pukul 15.00. Mereka ditangkap bersama sembilan orang lainnya, antara lain Alexandre da Costa Freitas, Celestino Pereira, Raimundo Pereira, Feliciano Correia, Jacob Correia, Mario Pereira Gusmão, Raimundo Freitas Correia, Cosme Gusmão, [dan] Rui Francisco Correia oleh Tim Lorico, salah satu nama grup Hansip di Baucau. Setelah itu sepuluh orang tahanan tersebut dibawa ke Ostico dengan berjalan kaki sambil tangan mereka diikat secara bersama. Mereka ditangkap karena [dicurigai] sering bertemu dengan Panglima Falintil Xanana Gusmão di Diuk. Sejak penangkapan hingga sekarang tidak diketahui di mana keberadaan mereka.⁶⁴¹

Tabel 32: Orang-orang yang dihilangkan dari Desa Ossoala, 23 September 1983, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|--------------------|--------------|---------|------|-----------|------------|
| Mário P Gusmão | 23 Sep. 1983 | Ossoala | | | hilang |
| Cosmé Gusmão | 23 Sep. 1983 | Ossoala | | | hilang |
| Celestino Pereira | 23 Sep. 1983 | Ossoala | | | hilang |
| Raimundo Pereira | 23 Sep. 1983 | Ossoala | | | hilang |
| André Gusmão | 23 Sep. 1983 | Ossoala | | | hilang |
| Felicano Correia | 23 Sep. 1983 | Ossoala | | | hilang |
| Alexandre da Costa | 23 Sep. 1983 | Ossoala | | | hilang |
| Raimundo F Correia | 23 Sep. 1983 | Ossoala | | | hilang |
| Rui F Correia | 23 Sep. 1983 | Ossoala | | | hilang |
| Jacob Correia | 23 Sep. 1983 | Ossoala | | | hilang |

567. José Meneses dilaporkan telah disiksa sampai mati oleh militer Indonesia pada Juli 1983 ketika berada di penahanan di Baucau.⁶⁴² Seorang laki-laki bernama Sies Coò Saba dilaporkan ditangkap di Tekinomata (Laga) dan kemudian dibawa ke Lacudala di mana dia dieksekusi oleh militer Indonesia.⁶⁴³ Di Garuai (Baucau) seorang laki-laki bernama João Bosco bersama dengan empat orang lainnya dilaporkan dieksekusi oleh militer Indonesia pada 1983.⁶⁴⁴

568. Pola penahanan dan pembunuhan atau penghilangan ini berlanjut di Distrik Baucau memasuki tahun 1984. Pada 8 Maret 1984, Simplisio Guterres dilaporkan ditangkap di Uailili (Baucau) oleh anggota Hansip dan menghilang.⁶⁴⁵ Menurut laporan, pada 24 Maret 1984 Hermenegildo P. Guterres dilaporkan dibunuh oleh anggota Batalion Infanteri 501 di Baguia.⁶⁴⁶ Juga pada Maret militer Indonesia menangkap Joaquim Neto da Costa di Triloka (Baucau); dia dilaporkan dibunuh pada Mei 1984.⁶⁴⁷ Pada 13 Mei 1984 tentara Falintil menyerang Cairabela Taci (Vemasse) dan membunuh paling tidak dua tentara Indonesia, dua Hansip, dan tiga penduduk sipil. Militer Indonesia melakukan pembalasan dengan menangkap dan membunuh orang dalam jumlah yang tidak diketahui.⁶⁴⁸ Di Bucoli (Baucau), pada 30 Mei 1984, militer Indonesia menangkap Tomàs da Silva, Jacinto da Silvas, serta Vicente Freitas, dan membawa mereka ke Baucau. Malam itu mereka dilaporkan dibunuh oleh militer Indonesia.⁶⁴⁹

569. Seorang deponen lain memberitahu Komisi bahwa pada Mei 1984 seorang laki-laki bernama Antonio Ximenes dan Domingos Santos lenyap di Kodim Baucau. Istri mereka diberitahu bahwa mereka dikirim sekolah.⁶⁵⁰ Komisi juga menerima laporan bahwa pada Agustus 1984 dua orang laki-laki dibunuh di Baguia oleh anggota-anggota Batalion 501 dan seorang lagi yang bernama Leão disiksa dan kemudian meninggal di rumah sakit di Baucau.⁶⁵¹

570. Peristiwa penahanan dan penghilangan yang khas berlangsung di Kodim Baucau pada November 1984. Menurut kesaksian pada saksi, enam penduduk sipil ditahan di Kodim Baucau, dan dua di antaranya menghilang. Seorang deponen mengatakan kepada Komisi:

Pada tanggal 1 November 1984, di lokasi Ossoala, sekitar sore jam 15.00 Bimpolda desa Tasi dengan senjata datang menangkap kami: saya, Isabel Soares, Flizarda Soares, Juliana Soares, Faustino da Costa dan Filomeno da Costa. [Kami] dibawa ke tempat Nanggala di Loihubu dan kemudian dipindahkan ke Kodim Baucau. Kami diinterogasi satu per satu oleh seseorang yang bernama M320 Ia menanyakan tentang keluarga kami yang masih ada di hutan. Di Kodim Baucau kami ditahan secara terpisah. Saya dengan teman lainnya, Filomeno da Costa dan Faustino da Costa ditahan di pos Nanggala selama tiga hari. [Namun] kedua teman kami sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.⁶⁵²

571. Komisi juga menerima informasi mengenai pembunuhan di luar hukum terhadap seorang laki-laki bernama Raimundo Ximenes, yang ditahan dari Manatuto, dan menurut laporan dieksekusi di markas Kodim Baucau, mungkin oleh anggota Hansip.⁶⁵³

Tabel 33: Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan dari Baucau, 1983 - 1984, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|------------------------|--------------|--------------------|------|-----------|--------------------------|
| João Bosco | 1983 | Gariwai | | | dieksekusi |
| Sies Co'o Saba | 1983 | Lakudala | | | dieksekusi |
| José Meneses | Juli 1983 | Baucau | | | meninggal akibat disiksa |
| Simplisio Guterres | 8 Mar. 1984 | Wailili | | | hilang |
| Filomeno Guterres | 8 Mar. 1984 | Ossoala | | | hilang |
| Hermenegildo. Guterres | 24 Mar. 1984 | Baguia | | | dibunuh |
| Joaquim N da Costa | Mei 1984 | Triloka | | | dibunuh |
| Tomàs da Silva | 30 Mei 1984 | Baucau | | | dieksekusi |
| Jacinto da Silva | 30 Mei 1984 | Baucau | | | dieksekusi |
| Antonio | Mei 1984 | Kodim Baucau | | | hilang |
| Domingos | Mei 1984 | Kodim Baucau | | | hilang |
| Gaspar | 1984 | Kodim Baucau | | | dibunuh |
| Jacinta | 1984 | Kodim Baucau | | | hilang |
| Hermenegildo | Agu. 1984 | Baguia | | | dibunuh |
| Leão | c. Agu. 1984 | Rumah sakit Baucau | | | meninggal akibat disiksa |
| Filomeno da Costa | Nov. 1984 | Kodim Baucau | | | hilang |
| Faustino da Costa | Nov. 1984 | Kodim Baucau | | | hilang |
| Raimundo Ximenes | | Kodim Baucau | | | dieksekusi |

Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa di Dili dan Wilayah Tengah 1983-1984

572. Dili dan distrik-distrik tengah menunjukkan jumlah insiden pelanggaran fatal yang relatif lebih rendah selama periode ini dibandingkan dengan tingginya angka pembunuhan dan penghilangan yang diterima oleh Komisi yang terjadi di daerah timur pada periode ini.

Dili

573. Di Distrik Dili, pelanggaran-pelanggaran yang paling fatal berlangsung setelah periode penahanan. Contohnya, Komisi menerima sebuah laporan bahwa pada 1983, sebelas penduduk sipil yang tidak diketahui identitasnya yang ditahan di Penjara Balide dibawa keluar dan setelah itu menghilang.⁶⁵⁴ Seorang

informan lain memberitahu Komisi bahwa seorang laki-laki bernama Antonio Mesquito dinyatakan dari penjara Balide pada Oktober 1983 oleh komandan Korem.⁶⁵⁵ Seorang informan lain mengatakan kepada Komisi bahwa João Soares (dari Viqueque), Antonio Piedade (dari Ossu), dan Helder Jordão (dari Dili) dinyatakan dari pusat penahanan Sang Tai Hoo di Dili pada Desember 1983 atau awal 1984.⁶⁵⁶

574. Penghilangan lain yang dilaporkan ke Komisi termasuk seorang laki-laki bernama Julio Maia yang dihilangkan dari Dili oleh Komando Pasukan Khusus, pada 1984.⁶⁵⁷ Pada awal Januari 1984, Francisco de Jesus ditangkap dan kemudian menghilang dari markas Koramil di Dili Timur.⁶⁵⁸ 4 Februari 1984, Laurindo Sarmiento Tilman diduga dihilangkan oleh militer Indonesia di Dili.⁶⁵⁹

575. Banyak dari mereka yang ditangkap selama operasi pembersihan di seluruh wilayah ini diambil dari distrik asal mereka ke Dili untuk diinterogasi. Di antaranya ada beberapa yang hilang atau dibunuh dalam tahanan. Sekitar 25 dari satu kelompok 40 orang yang ditahan di Dili dibunuh setelah dipindah ke Penjara Penfui di Kupang (Timor Barat, Indonesia) pada akhir Agustus 1983. Mereka termasuk anggota organisasi klandestin dari Viqueque, Baucau, dan Dili sendiri, serta sekitar 17 orang dari Laga (Baucau) yang ditangkap bersama komandan Falintil, Cancio Gama (Lima Gama). Kelompok ini termasuk 15 pasukan Falintil, satu perempuan dan satu anak-anak.* Tahanan pindahan pertama yang diambil dari penjara dan hilang berjumlah 17 orang. Orang lain yang dilaporkan hilang adalah lima anggota jaringan klandestin dari Baucau: Antonio Espirito Santo, Isidoro Caibada, Benjamin Leki Osso, Carlos Nahareka (Carlos Alves), dan Adolfo Fraga dari Uailili. Selain tahanan yang dibawa dari Penjara Penfui dan hilang, ada paling tidak satu anggota kelompok, Duarte Ximenes dari Bazartete (Liquiça) yang meninggal akibat kekurangan makan berat saat di penjara.

576. Hanya 14 dari kelompok 40 orang hidup. Mereka berutang budi atas nyawa mereka kepada tahanan di Ataúro yang memberitahu ICRC tentang penderitaan para tahanan di Penfui. ICRC berhasil meyakinkan agar mereka dikembalikan pada Juli 1984. Saat kembali, beberapa dari mereka diikat dan dihukum.⁶⁶⁰

* Menurut satu sumber, Cancio Gama dan pengikutnya ditangkap pada saat gencatan senjata berhenti karena dia terlalu pelan meninggalkan Laga di mana dia tinggal selama gencatan senjata [Wawancara CAVR dengan Justo Talenta, 3 November 2001]. Perlakuan yang sangat kejam terhadap dia dan kelompoknya mungkin terkait dengan pertemuan "kebetulan" dengan delegasi parlemen Australia di jalan dekat Soba pada 29 Juli 1983 di mana dia melakukan pembicaraan dengan dan memberikan surat kepada pemimpin delegasi, Senator Bill Morrison [lihat *Official Report of the Australian Parliamentary Delegation to Indonesia*, Apendiks 22: Documents Associated with Chance Meeting with Fretilin, Friday 29 July 1983 at Soba, East Timor, hal. 154-171].

Tabel 34: Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan dari tahanan di Dili, 1983 - 1984, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|------------------------|----------------------|---------------------|------|-----------|----------------------|
| Antonio Mesquito | Okt. 1983 | Penjara Balide | | | hilang |
| João Soare | Akhir 1983 atau 1984 | Sang Tai Hoo | | | hilang |
| Antonio Piedade | Akhir 1983 atau 1984 | Sang Tai Hoo | | | hilang |
| Helder Jordão | Akhir 1983 atau 1984 | Sang Tai Hoo | | | hilang |
| Julio Maia | 1984 | Dili | | | hilang |
| Francisco de Jesus | Jan. 1984 | Koramil | | | hilang |
| Laurindo S. Tilman | 4 Feb. 1984 | Dili | | | hilang |
| Cancio Gama | Agu.-Sep. 1983 | Kupang, Timor Barat | | Falintil | hilang |
| Antonio Espirito Santo | Mar. 1984 | Kupang, Timor Barat | | | hilang |
| Isidoro Caibada | Mar. 1984 | Kupang, Timor Barat | | | hilang |
| Benjamin Leki Osso | Mar. 1984 | Kupang, Timor Barat | | Guru | hilang |
| Carlos Nahareka | Mar. 1984 | Kupang, Timor Barat | | | hilang |
| Adolfo Fraga | Mar. 1984 | Kupang, Timor Barat | | | hilang |
| Duarte Ximenes | 1983-1984 | Kupang, Timor Barat | | | meninggal di tahanan |

Aileu

577. Demikian halnya di Distrik Aileu selama periode ini, operasi-operasi militer berujung pada penahanan dan diikuti dengan pembunuhan atau penghilangan paksa terhadap penduduk-penduduk sipil. Pada 30 Agustus 1983, sekurangnya 16 laki-laki ditangkap dan ditahan oleh militer Indonesia di markas Kodim di Aileu. Empat di antaranya dibunuh, dan satu orang, Moises Sarmento, menghilang. Menurut kesaksian seorang saksi, mereka ditahan karena dicurigai telah membantu Falintil pada saat berlangsungnya gencatan senjata. Seorang deponen berkata kepada Komisi:

Pada tanggal 2 September 1983, Romaldo dan kawan-kawannya Luis Mouzinho, Mariano de Deus, Agustinho Pereira, Caitano Soares, Joaquim Hendrique, Crispin dos Santos, Paul Soares, Moises Sarmento, Grasiano Pinto, Antonio de Deus, Bernardino, Victor Augusto, Afonso, dan Ananias ditangkap oleh pasukan Kodim dan seorang Hansip. Pada saat ditangkap para korban dibawa ke Likereleu, Suco Fatisi. Di sana Luis Mouzinho dipukul dengan besi beton hingga dahinya robek dan berdarah. Ia kemudian dibawa oleh para pasukan tersebut dan ditembak mati di Ruasu...⁶⁶¹

578. Empat orang lainnya dilaporkan dibunuh atau dihilangkan dari kelompok tahanan ini.⁶⁶² Pada 16 Oktober 1983, Felix Amaral dilaporkan dieksekusi oleh militer Indonesia di Laulara (Dili, dekat perbatasan dengan Aileu). Komisi mengidentifikasi korban-korban di Aileu berikut ini:

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|-----------------|----------------|---------------|-------------|------------------|---------------------|
| Luis Mouzinho | 2 Sep. 1983 | | | | diembak |
| Ananias Soares | 3 Sep. 1983 | | | | hilang? |
| Antonio | Sep. 1983 | | | | dipukul sampai mati |
| Afonso | Sep. 1983 | | | | dipukul sampai mati |
| Moises Sarmento | 1983 | | | | hilang |
| Felix Amaral | 16 Okt. 1983 | Laulara | | | dieksekusi |

Manufahi

579. Diincarnya seluruh keluarga oleh pasukan keamanan Indonesia menyebabkan beberapa keluarga mengalami kehilangan dan penderitaan yang berlipat ganda, seperti yang diungkapkan dalam dua contoh dari Distrik Manufahi di bawah ini. Seorang deponen bercerita kepada Komisi mengenai penahanan dan hilangnya anggota-anggota keluarganya:

Pada tahun 1983 TNI menangkap 12 orang warga sipil, termasuk anggota keluarga saya, Francisco da Costa, Erminia da Costa, Pedro da Costa, Frederico da Costa, Filomena da Costa, dan Maria da Costa. Saya tidak mengetahui nama-nama korban yang lain. Mereka ditahan di Polres Same. Kemudian TNI mengeluarkan para tahanan tersebut dan [mereka] dibunuh di tempat lain yang tidak diketahui. Hanya Maria da Costa yang selamat dari pembunuhan tersebut...

Kemudian pada tahun yang sama adik saya yang bernama Domingos Ribeiro ditangkap oleh anggota Kodim Same dan Polisi Same di Ailau/Letefoho. Mereka mengatakan ia "dibawa untuk sekolah ke Dili". Setelah dua minggu, saat saya mengunjunginya sambil membawa makanan, ia tidak ditemukan lagi. Kemudian saya diinformasikan oleh seseorang bahwa adik saya bersama dua orang lain sudah meninggal di sebuah gua di Same.⁶⁶³

580. Moises Fernandes bercerita kepada Komisi bagaimana dia dan keluarganya ditahan oleh tentara Indonesia di Alas. Ketika berada dalam penahanan, dia menyaksikan kematian seorang tahanan akibat dipukuli. Anak perempuannya sendiri meninggal karena penyakit yang diderita di tahanan:

Pada tanggal 1 Mei 1984, saya beserta anggota keluarga saya, Lucia Maria de Fatima dan Nijela Libania, ditangkap oleh Batalion 512. Kami ditahan selama empat hari di Taitudak [Alas, Manufahi] bersama dua orang yang bernama Paul dan Zacarias. Pada tanggal 4 Mei 1984 saya beserta Paul dan Zacarias dipindah paksa ke Kodim Manufahi. Kami diinterogasi oleh Kasi I Kodim Manufahi bernama M321. Tiga hari kemudian anggota TNI merendam saya dalam kolam selama tiga jam, setelah itu [saya] dipukul, ditinju, ditendang, dibakar pakai rokok, dipukul dengan kayu dan tanduk kerbau dan senjata. Saya ditahan selama tiga bulan di Kodim Manufahi. Pada waktu itu seorang tahanan bernama João Guido disiksa dan ditendang oleh seorang polisi hingga meninggal dunia. Pada tahun yang sama anak saya, Nijela, meninggal dunia di tahanan karena sakit.⁶⁶⁴

581. Pada 7 Agustus 1983, Domingos, Augusto dan Leopoldino diduga dibunuh oleh anggota-anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassandha) di Holarua.⁶⁶⁵ Pada September 1983, anggota Kodim membunuh Jaime da Costa, yang berumur 20 tahun, dan Américo Tomás yang berumur 32 tahun, di Tutuloro.⁶⁶⁶ Komisi juga menerima laporan mengenai eksekusi terhadap tiga orang tak dikenal di Babulo, Manufahi pada 1983.⁶⁶⁷

582. Pada April 1984, Filomeno de Jesus Borges, Mateus, dan Manuel dilaporkan dipukuli hingga mati oleh anggota militer Indonesia di Manumera.⁶⁶⁸ Pada 1984, seorang yang bernama João Zino juga dilaporkan mati ketika ditahan di markas Kodim Same.⁶⁶⁹

Tabel 36: Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan dari Manufahi, 1983 - 1984, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|--------------------|-------------|----------|------|-----------|---------------------|
| Domingos | 7 Agu. 1983 | Hola Rua | | | dibunuh |
| Agusto | 7 Agu. 1983 | Hola Rua | | | dibunuh |
| Leopoldino | 7 Agu. 1983 | Hola Rua | | | dibunuh |
| Jaime da Costa | Sep. 1983 | Tutuloro | 20 | | dibunuh |
| Américo Tomás | Sep. 1983 | Tutuloro | 32 | | dibunuh |
| Francisco da Costa | 1983 | Same | | | dibunuh |
| Erminia da Costa | 1983 | Same | | | dibunuh |
| Pedro da Costa | 1983 | Same | | | dibunuh |
| Frederico da Costa | 1983 | Same | | | dibunuh |
| Filomeno da Costa | 1983 | Same | | | dibunuh |
| Domingos Ribeiro | 1983 | Same | | | dibunuh |
| Filomeno Borges | Apr. 1984 | Manumera | | | dipukul sampai mati |

| | | | | | |
|-----------|-----------|----------|--|--|---------------------|
| Mateus | Apr. 1984 | Manumera | | | dipukul sampai mati |
| Manuel | Apr. 1984 | Manumera | | | dipukul sampai mati |
| João Zino | Mei 1984? | Same | | | dalam tahanan |

Ainaro

583. Komisi tidak menerima laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran fatal di Distrik Ainaro yang terjadi pada 1983. Meskipun demikian, selama paruh pertama 1984, pasukan keamanan Indonesia menyiksa dan mengeksekusi sejumlah orang di Ainaro. Pada 20 Februari 1984, Silvano de Araújo dilaporkan dibunuh di halamannya di Desa Soro oleh seorang anggota Babinsa dan seorang Hansip.⁶⁷⁰ Pada 19 Maret 1984, seorang laki-laki bernama Manuel, yang berumur 42 tahun, dibunuh, dan pada 29 Maret 1984, seorang lagi yang bernama Nuno dibunuh.⁶⁷¹ Pada 29 Mei 1984, anggota unit Nanggala diduga menangkap dan mengeksekusi Lourenço dos Reis di Hato Udo.⁶⁷²

584. Duarte Gaspar Corte Real mengatakan kepada Komisi bahwa pada 1984 satu unit Nanggala memasuki Hato Udo dan membunuh banyak orang. Sebagai kepala unit Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD), Duarte diminta untuk membuat daftar 50 nama dan memberikannya kepada ketua Chandraca 11 pada Mei 1984. Antara Juni dan Juli 1984, Nanggala 11 membunuh sekurangnya empat penduduk sipil di Hato Udo.⁶⁷³ Menurut Duarte, empat penduduk sipil lainnya juga diincar untuk dibunuh. Namun demikian, ketika tentara-tentara baru tiba untuk menggantikan Chandraca 11, keempat nama tersebut tidak diserahkan kepada tentara-tentara baru itu karena komunitas mengadakan pesta perpisahan dengan maksud untuk mengalihkan perhatian mereka dari tugas ini.⁶⁷⁴

Tabel 37: Orang-orang yang dieksekusi di Ainaro, 1984, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|-------------------|---------------|----------|-------|-----------|------------|
| Silvano de Araújo | 20 Feb. 1984 | Soro | | | dibunuh |
| Manuel | 19 Mar. 1984 | Ainaro | 42 | | dibunuh |
| Nuno | 29 Mar. 1984 | Ainaro | | | dibunuh |
| Lourenco dos Reis | 29 Mei. 1984? | Hatu Udo | | | dieksekusi |
| Valente Amaral | 29 Mei. 1984 | Hatu Udo | 50-an | | dieksekusi |
| João Xavier | 29 Mei. 1984 | Hatu Udo | 60-an | | dieksekusi |
| João Xavier | 29 Mei. 1984 | Hatu Udo | 45 | | dieksekusi |

Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan di wilayah barat (1983-1984)

Distrik Covalima, Bobonaro, dan Liquiça

585. Setelah terjadi sebuah serangan oleh Falintil di mana tujuh personel militer Indonesia terbunuh di Zolo (Zumalai) pada 7 Desember 1983,⁶⁷⁵ personel militer Indonesia di Distrik Bobonaro menangkap sejumlah besar penduduk di Subdistrik Bobonaro serta Subdistrik Zumalai yang bertetangga (Covalima). Mereka kemudian ditahan di markas Koramil di Bobonaro.⁶⁷⁶ Baik penduduk laki maupun perempuan ditangkap semena-mena, kadang hanya karena nama mereka mirip dengan nama orang-orang yang dicurigai membantu Resistansi. Di antara orang-orang yang ditahan, banyak yang dipukuli atau disiksa secara kejam, yang lainnya dieksekusi atau hilang.⁶⁷⁷

586. Menurut beberapa kesaksian, personel militer Indonesia dan anggota Hansip memindahkan empat orang tahanan sekaligus dari penjara di Bobonaro pada malam hari, mengikat mereka dengan tali, dan membawa mereka untuk dieksekusi. Ketika personel militer dan Hansip kembali ke penjara, mereka memberitahu para tahanan lainnya bahwa orang-orang yang dibawa “telah pindah ke sebuah rumah baru”. Armando dos Santos, seorang guru agama, memberitahu Komisi:

Saya baru ditangkap...pada tanggal 20 April 1984. Sebelum saya menjadi tahanan, saya mendengar bahwa sudah enam kali [ABRI] mengeluarkan orang untuk dibunuh selama satu bulan. Jumlah yang mereka keluarkan setiap kali adalah empat orang. Saya menyaksikan sendiri ketika saya berada di penjara. Korban [penghilangan] berikutnya adalah José, Marcelo, João Mauati, dan João Dasimau. Ini merupakan pembunuhan terakhir pada masa Paskah di Bobonaro. Sebelum dibunuh, kami berkumpul bersama, saling merangkul, dan menangis. Mereka yang dibunuh itu saya kenal karena mereka murid saya. Misa Paskah selesai baru mereka dikeluarkan untuk dibunuh.⁶⁷⁸

587. Komisi memiliki alasan untuk merasa yakin bahwa hampir 40 penduduk sipil dibunuh atau hilang di Koramil Bobonaro pada 1984.*

* Lihat daftar 40 orang korban berjudul “Daftar nama korban yang dibantai tahun 1984 di Bobonaro” yang diberikan oleh Olandino Guterres, dalam “Laporan Distrik Bobonaro, CAVR” (Laporan Penelitian CAVR, Distrik Bobonaro) 11-14 Juni 2003. Lihat juga Pernyataan-pernyataan HRVD 05169; 08182; 08143; lihat juga Laporan Amnesty International, 1985 hal. 216-217.

Tabel 38: Nama-nama orang yang dieksekusi atau dihilangkan dari Koramil Bobonaro, 1984, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Alamat | Umur | Pekerjaan |
|------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|
| Miguel Bere Loco | Colimau, Bobonaro | 45 | Hansip |
| Alcino Dato Daci | Colimau, Bobonaro | 34 | |
| Cipriano de Araújo | Malibu, Bobonaro | 32 | |
| Armindo Ati Mau | Malibu, Bobonaro | 29 | |
| Armindo Mau Mali | Malibu, Bobonaro | 16 | Pelajar |
| Armando Malilesu | Malibu, Bobonaro | 17 | Pelajar |
| Afonso Beremali | Malibu, Bobonaro | 15 | Pelajar |
| Marcus Mauleto | Malibu, Bobonaro | 56 | |
| Abel Bere Dasi | Colimau, Bobonaro | 24 | |
| Manule Bere Sura | Colimau, Bobonaro | 26 | |
| Clementino Bere | Colimau, Bobonaro | 36 | |
| José Ati Mali | Colimau, Bobonaro | 45 | |
| Afonso Mali Tai | Kotabot, Bobonaro | 46 | Hansip |
| Florindo Mau Ati | Kotabot, Bobonaro | 41 | |
| Pedro Noronha | Kotabot, Bobonaro | 14 | Pelajar |
| Julio Mau Loko | Kotabot, Bobonaro | 35 | |
| José Rasi Bere | Kotabot, Bobonaro | 21 | |
| Mateus Sina Boe | Kotabot, Bobonaro | 38 | |
| Mariano Bere Tai | Colimau, Bobonaro | 18 | |
| Afonso Mau pelu | Kotabot, Bobonaro | 53 | |
| Dominggos Bere Tai | Carabau, Bobonaro | 49 | |
| Marcello Pereira | Carabau, Bobonaro | 27 | |
| João Manu Tai | Carabau, Bobonaro | 24 | |
| João Francolin | Carabau, Bobonaro | 28 | |
| Mateus Malimau | Carabau, Bobonaro | 30 | |
| Mateus Maia | Tasibalu Carabau, Bobonaro | 45 | Pelajar |
| Daniel Maubere | Uduhai, Carabau, Bobonaro | 16 | |
| Carlito Tasi | Uduhai, Carabau, Bobonaro | 18 | Pelajar |
| Tailoko Baluk | Tasibalu, Carabau, Bobonaro | 35 | |
| Anastacio A. das Neves | Tasibalu, Carabau, Bobonaro | 48 | |
| Francisco Bere Mau | Lefo, Zumalai-Suai | 48 | |
| Angelino Mauleso | Lefo, Zumalai-Suai | 19 | |
| Martinho Bere Mau | Lefo, Zumalai-Suai | 26 | |

| | | | |
|-------------------|--------------------|----|---------|
| Ernesto Bere Dasi | Lefo, Zumalai-Suai | 39 | |
| Felix Mau Loko | Lefo, Zumalai-Suai | 15 | Pelajar |
| Alfredo Soares | Lefo, Zumalai-Suai | 35 | |
| Paul Bere | Lefo, Zumalai-Suai | 49 | |
| Fernando de Sena | Lefo, Zumalai-Suai | 50 | |
| Agustino L | Lefo, Zumalai-Suai | 53 | |
| Felisiano Mau Ati | Lefo, Zumalai-Suai | 42 | |

588. Menurut seorang informan, anggota militer Indonesia mengeksekusi Afonso Maia, Alfredo Nacimiento, José de Sena, dan Martinho de Sena di Sungai Lomea pada 1984.⁶⁷⁹ Seorang informan lain memberitahu Komisi bahwa pada 1984, Rojito dos Santos, Carlos Magno, dan João Magno ditahan di Koramil Zumalai dan kemudian dieksekusi di Sungai Lomea.⁶⁸⁰ Seorang informan lain memberitahu Komisi bahwa delapan orang yang tidak dikenal dieksekusi oleh Batalion Infanteri 412 di Talegol Lolo Leten pada awal 1984.⁶⁸¹ Pada akhir Februari 1984, Afonso da Cruz ditangkap, diinterogasi, dipaksa membantu ABRI mencari Fretilin/Falintil, dan kemudian dibunuh oleh anggota-anggota Hansip di Baganasa (Zumalai). Pada 8 Maret 1984, José Cardoso ditangkap di Desa Lour karena menyembunyikan bendera Fretilin di rumahnya. Dia dibawa ke kantor Koramil, disiksa, dan kemudian dieksekusi.⁶⁸²

589. Komisi menerima laporan tentang penangkapan dan pembunuhan lebih jauh di Lour menyusul konfrontasi besar antara ABRI dan Falintil di sana pada Juli 1984. Pada 13 Juli, Simião Pereira, Miguel Pereira, dan Jaime de Jesus ditangkap di Lour dan dibawa ke Bobonaro di mana mereka dibunuh oleh militer Indonesia.⁶⁸³ Sekurangnya 20 orang dari Lour ditangkap dan dibunuh oleh militer Indonesia, termasuk Pasukan Khusus yang berbasis di Bobonaro. Olandino Guterres memberitahu Komisi:

*Bulan Juli 1984, pasukan TNI dari Yonif 407 bersama para Hansip datang ke Pelek [Lour]. Saat itu para pelaku lengkap dengan senjata SKS dan AR 16. Di lokasi tersebut sekitar 20 orang ditangkap. Yang saya kenal adalah: Vitorino, Joaquim, dan Luis. Setelah ditangkap di lokasi tersebut, para korban dipukul hingga babak belur, kemudian dipisahkan: 7 korban diserahkan kepada Yonif 412 dan dibunuh, sementara 13 orang lainnya dibawa oleh Yonif 407 dan diserahkan kepada Camat Bobonaro. Di sana para korban semuanya dibunuh.*⁶⁸⁴

Tabel 39: Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan di Distrik Covalima dan Bobonaro, 1984, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|--------------------|-----------------|----------|------|-----------|------------|
| Afonso Maia | 1984 | Lomea | | | dibunuh |
| Alfredo Nascimento | 1984 | Lomea | | | dibunuh |
| José de Sena | 1984 | Lomea | | | dibunuh |
| Martinho de Sena | 1984 | Lomea | | | dibunuh |
| Rojito dos Santos | 1984 | Lomea | | | dibunuh |
| Carlos Magno | 1984 | Lomea | | | dibunuh |
| João Magno | 1984 | Lomea | | | dibunuh |
| Afonso da Cruz | Feb. 1984 | Baganasa | | | dibunuh |
| José Cardoso | 8 Mar. 1984 | Zumalai | | | dieksekusi |
| José | Apr. - Mei 1984 | Bobonaro | | | dieksekusi |
| Marcello | Apr. - Mei 1984 | Bobonaro | | | dieksekusi |
| João Mauati | Apr. - Mei 1984 | Bobonaro | | | dieksekusi |
| João Dasimau | Apr. - Mei 1984 | Bobonaro | | | dieksekusi |
| Simião Pereira | Juli 1984 | Bobonaro | | | dieksekusi |
| Miguel Pereira | Juli 1984 | Bobonaro | | | dieksekusi |
| Jaime de Jesus | Juli 1984 | Bobonaro | | | dieksekusi |
| Vitorino | Juli 1984 | Bobonaro | | | dieksekusi |
| Joaquim | Juli 1984 | Bobonaro | | | dieksekusi |
| Luis | Juli 1984 | Bobonaro | | | dieksekusi |

590. Komisi juga menerima daftar 40 individu dari Distrik Bobonaro dan Covalima yang dilaporkan terbunuh oleh militer Indonesia pada 1984.⁶⁸⁵

591. Komisi menerima informasi tentang sejumlah orang yang dieksekusi atau hilang setelah ditahan oleh Batalion Infanteri 412. Alberto dibunuh di Tibar (Liquiça) pada 1984;⁶⁸⁶ Domingos Lobato dibunuh di Ulmera pada 1984;⁶⁸⁷ pada 14 Februari 1984 anggota batalion ini melenyapkan seorang lelaki bernama Lekimosu di Tibar (Liquiça);⁶⁸⁸ pada April seorang bernama Mauseira hilang di Riheu;⁶⁸⁹ Afonso de Araújo hilang di Liquiça;⁶⁹⁰ dan pada November 1984 Cananti da Silva ditangkap, dilaporkan dibawa ke Dili dan kemudian menghilang.⁶⁹¹ Laporan-laporan lain mengenai penghilangan di Liquiça yang diterima Komisi termasuk hilangnya Manuel Soares dari Ulmera pada 1983;⁶⁹² penangkapan dan hilangnya João Martins Pereira dari rumahnya di Tibar pada 22 April 1984; dan, pada 27 April 1983, penangkapan dan hilangnya Maubere dan Orlando di Fahilebo (Bazartete) oleh anggota Pasukan Khusus (Kopassandha).⁶⁹³

Tabel 40: Orang-orang yang dieksekusi atau dihilangkan di Liquiça, 1983 - 1984, yang dilaporkan kepada CAVR

| Nama | Tanggal | Tempat | Umur | Pekerjaan | Keterangan |
|----------------------|---------------|----------|------|-----------|------------|
| Manuel Soares | 1983 | Ulmera | | | hilang |
| Alberto | 1984 | Tibar | | | dibunuh |
| Domingos Lobato | 1984 | Ulmera | | | dibunuh |
| Lekimosu | 14 Feb. 1984 | Tibar | | | hilang |
| Mausera | Apr. 1984 | Riheu | | | hilang |
| Afonso de Araújo | Apr. 1984 | Liquiça | | | hilang |
| João Martins Pereira | 22 Apr. 1984 | Tibar | | | hilang |
| Maubere | 27 Apr. 1984 | Fahilebo | | | hilang |
| Orlando | 27 Apr. 1984 | Fahilebo | | | hilang |
| Cananti da Silva | 12. Nov. 1984 | Tibar | | | hilang |

Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh TNI 1985-1989

592. Tidak seperti periode sebelumnya, eksekusi di luar hukum dan penghilangan dari 1985-1988 menurun tajam. Sebagian besar kasus yang didokumentasi oleh Komisi terjadi di distrik-distrik timur (Lautém, Baucau, dan Viqueque) dengan sejumlah kecil peristiwa terjadi di distrik-distrik lainnya. Banyak korban selama akhir 1980-an diincar karena mereka anggota jaringan klandestin atau memiliki hubungan keluarga dengan anggota Fretilin atau Falintil. Selama periode ini, komando militer tertinggi, Koopskam, dijalankan oleh Divisi Infanteri 1 Kostrad yang menjalankan Operasi Watumisa 1 dan 2. Publikasi militer melaporkan penangkapan sejumlah besar orang yang dianggap “GPK” (Gerombolan Pengacau Keamanan): 328 pada 1985, 364 pada 1986, 327 pada 1987; dan 98 antara Januari dan 8 Juli 1988. Tetapi, pertempuran-pertempuran kecil antara Falintil dan pasukan Indonesia berlanjut pada periode ini. Selama tahun-tahun tersebut, ABRI kehilangan 122 orang anggota pada 1985, 169 pada 1986, 92 pada 1987, dan 66 pada enam bulan pertama 1988.’

593. Keputusan Desember 1988 untuk “membuka” Timor Timur diiringi dengan diambilnya kebijakan militer baru yang “lebih lunak” (lihat Bagian 4.2: Rezim Pendudukan) yang tecermin pada menurunnya pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilakukan ABRI menjelang akhir 1980-an.

* 35 Tahun Darma Bakti Kostrad, [informasi sumber ini belum lengkap], hal. 86-88.

Eksekusi di luar hukum dan penghilangan paksa di Wilayah Timur (1985-1989)

594. Komisi menerima laporan tentang sekurangnya 42 orang yang dibunuh atau hilang selama periode ini di Distrik Lautém, Baucau, dan Viqueque. Sebagian besar kasus ini melibatkan penahanan dan selanjutnya pembunuhan atau penghilangan korban seperti tampak dalam contoh-contoh di bawah ini:

- Pada 1988, seorang perempuan bernama Carmila Cabral dibawa dari rumah Alcina Maria di Lore I (Lospalos, Lautém) oleh anggota zenit tempur (Zipur). Ia telah tinggal di rumah Alcina Maria selama dua bulan setelah ibunya, Rosa Maria, pergi sembunyi ke hutan. Ia diserahkan ke Batalion 744 dan tidak pernah kembali.⁶⁹⁴
- Pada 15 Agustus 1985, Adolfo Fraga, koordinator jaringan klandestin di Baucau, ditangkap oleh seorang perwira intelijen Kodim di rumah camat Baucau di Bahu, Baucau, tempat ia bersembunyi. Ia dibawa ke Kodim di Baucau dan kemudian hilang.⁶⁹⁵
- Pada Maret 1988, empat laki-laki ditangkap di Fatulia (Uatulia, Venilale, Baucau) oleh anggota Batalion Infanteri ke-328 dan kepala desa Uatulia. Mereka ditahan di pos batalion di Ubanakala dan disiksa ketika menolak memberi informasi mengenai keberadaan Falintil. Salah seorang dari mereka, bernama Joaquim, dilaporkan telah dieksekusi.⁶⁹⁶
- Pada 7 Maret 1985, Miguel Soares dan temannya Luis—keduanya aktif dalam gerakan klandestin—ditahan di Babulo (Uatolari, Viqueque) oleh *chefe de povoção* (kepala dusun) dan dibawa ke pos keamanan di *aldeia* Aliambata. Di sana keduanya dipukuli habis-habisan. Miguel meninggal akibat pemukulan tersebut.⁶⁹⁷
- Pada 8 Maret 1985, José da Costa, kepala *aldeia* Iralafai (Bauro, Lospalos, Lautém), dan lima lainnya, Cristovão Caetano, Francisco dos Santos, João Graciano, Pancrácio Pereira, dan Leopoldino, ditangkap oleh Babinsa setempat bernama Surmi dan dieksekusi.⁶⁹⁸
- Pada 1986, seorang lelaki bernama Armando dilaporkan ditahan dan dibunuh oleh anggota militer Indonesia di Ossu (Viqueque).⁶⁹⁹
- Pada 7 April 1986, sekelompok lelaki dilaporkan telah ditangkap di Buicaren (Viqueque, Viqueque) di mana mereka ditahan oleh sebuah unit Nanggala (Kopassus). Luis Pinto diduga telah disiksa dan kemudian meninggal.⁷⁰⁰
- Di Viqueque, pada Desember 1986, setelah sebuah penyerangan oleh Falintil, anggota-anggota Batalion 122 memanggil sejumlah lelaki di Beaco untuk diinterogasi. Seorang informan memberitahu Komisi:

Pada 16 Februari 1986, pasukan Fretilin menyerang beberapa anggota pelajar (SMP dan SMA) di lokasi Wenara. Para pelajar tersebut adalah Armindo Almeida, Julio da Silva, Alipio Soares, Jeronimo, Lourenco, José Mariano, dan José. Dalam penyerangan tersebut dua orang pelajar—yaitu Julio da Silva dan José Mariano—

tewas tertembak oleh pasukan Fretilin, sedangkan yang lainnya berhasil meloloskan diri. Akibat dari penyerangan tersebut, pada tanggal 18 Desember 1986 pasukan TNI dari Batalion 122 melakukan penangkapan terhadap enam orang masyarakat Beaçó, antara lain: Pedro Martins, Raul Izak, Alberto Sequilari, Miguel Gusmão, Paul de Araújo, dan Paul da Silva. Setelah ditangkap, para korban dibawa pergi entah ke mana, hilang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.⁷⁰¹

595. Pola lainnya adalah pembunuhan warga sipil yang dipaksa untuk ambil bagian dalam operasi-operasi militer, seperti terjadi pada tahun-tahun awal pendudukan. Sebagai contoh:

- Pada September 1986, anggota-anggota Kopassus menangkap Martinho Madeira, kepala *aldeia* di Fuat (Iliomar, Lautém). Dia dibawa ke Kodim di Baucau dan kemudian dikembalikan ke Iliomar. Sekembalinya di Iliomar ia disuruh oleh militer Indonesia untuk mencari Falintil di hutan dengan dibuntuti oleh anggota militer. Menurut dua orang saksi mata, begitu masuk hutan, tentara membunuhnya dan membakar mayatnya.⁷⁰²
- Pada 1987 Sersan Bayani, komandan pos Kopassus di Mehara (Tutuala, Lautém) menyuruh seorang korban perkosaan untuk mencari suaminya, anggota Falintil, di hutan. Ketika salah satu perempuan, Josefina, pergi mencari suaminya, anggota Batalion 144 menemukannya dan menembaknya mati.⁷⁰³
- Pada Februari 1987, Elias Fernandes dipaksa bergabung dengan anggota-anggota Hansip di Vessoru (Uatolari), tapi kemudian dibunuh oleh anggota-anggota militer Indonesia.⁷⁰⁴
- Pada 1988, anggota Batalion Infanteri 726 dan anggota Tim Makikit diduga membunuh Luis da Cruz dan Carlos da Silva ketika mereka akan bertugas jaga di Lacluta, Viqueque.⁷⁰⁵
- Juga di Viqueque, pada 14 Juli 1985, anggota Batalion Infanteri 321 membunuh seorang lelaki Timor yang terlibat dalam sebuah latihan militer di Afaloicai (Uato Carbau). Seorang deponen menjelaskan apa yang terjadi:

Pada tanggal 14 Juli 1985 tentara Indonesia dari Batalion 321 menembak mati korban Adelino Boro Kili di kecamatan Uato Carbau, Desa Afaloicai, persis di sebuah daerah yang bernama Betu Ana. Pada saat itu korban disuruh oleh Batalion 321 untuk melakukan latihan antigerilya. Latihan itu dilakukan untuk mengantisipasi serangan Falintil. Pada saat TNI dari Batalion 321 menyamar sebagai Falintil menyerang Desa Afaloicai pada jam tiga pagi, korban dan teman-temannya berperan sebagai keamanan desa dan menyusun strategi untuk menangkap Batalion 321 yang menyamar sebagai Fretilin. Pada saat korban bereaksi untuk menangkap musuhnya, korban langsung ditembak mati oleh salah satu anggota Batalion 321 persis di daerah Betu Ana Ho'.⁷⁰⁶

596. Sebagian besar korban pelanggaran-pelanggaran fatal tersebut memiliki hubungan tertentu dengan Fretilin/Falintil. Carlos dos Santos, sebagai contoh, dibunuh oleh pasukan ABRI di Lautém pada 1986 ketika dia sedang lari ke hutan untuk bergabung dengan pasukan Falintil.⁷⁰⁷ Pada 4 Maret 1987, di Mehara (Tutuala), Francisco Teles bertemu seseorang untuk membicarakan pembentukan sebuah sel klandestin. Orang tersebut memberitahu namanya ke Batalion 745. Para anggota Batalion 745 kemudian datang dan menembak mati Francisco Teles dan seorang temannya bernama Pedro Secundo.⁷⁰⁸

597. Akan tetapi, pelanggaran fatal lainnya tampaknya merupakan kasus-kasus acak pembunuhan penduduk sipil yang berada di tempat dan saat yang salah, atau karena telah melawan atau menyinggung anggota aparat keamanan. Kasus-kasus seperti ini diilustrasikan di dalam tabel berikut:

Tabel 41: Ringkasan pelanggaran fatal acak terhadap penduduk sipil di wilayah Timur, 1985 - 1989

| Distrik | Ringkasan |
|----------|---|
| Lautém | <p>Setelah penyerangan oleh Falintil atas Desa Ailebere Januari 1985, seorang lelaki bernama Zeferino Hornay kakinya terluka ketika ia sedang memperbaiki rumahnya, yang, seperti juga banyak rumah lainnya, telah dibakar dalam penyerangan tersebut. Ketika diketahui terluka, ia dibawa selama dua hari berturut-turut ke pos komando militer Indonesia di Iliomar untuk dirawat lukanya.⁷⁰⁹ Setelah kunjungannya yang kedua ke pos komando tersebut ia tidak pernah muncul lagi.⁷⁰⁹</p> <p>Juga pada 1987, Infante Pereira dibunuh oleh anggota-anggota Batalion 327 di Lore, Lospalos. Ia dibunuh di markas mereka di Gunung Maureno dengan ditusuk dengan bayonet di perutnya.⁷¹⁰</p> <p>Pada Agustus 1987, anggota-anggota Batalion 745 membunuh Manuel Mesquita di Fuiloro (Lospalos).⁷¹¹ Pada 7 Agustus 1988, anggota-anggota Batalion 511 dilaporkan telah menembaki empat orang lelaki dari Duadere (Moro) yang tengah keluar mencari makanan. Salah satu dari empat orang itu, Victor Morais, terluka di kakinya dan, tidak seperti tiga lainnya, tidak bisa melarikan diri. Anggota-anggota Batalion 511 kemudian menembak mati Victor Morais.⁷¹² Pada 28 Maret 1988 Lamberto Nunes, Angelo Baptista, dan Albino diperintahkan oleh pasukan dari Kodim 1629 untuk mengumpulkan bambu dari hutan. Dalam perjalanan pulang Albino memanjat pohon kelapa. Albino mengejek-ejek beberapa tentara Indonesia dan menantang mereka untuk menyerang. Tiba-tiba, seorang anggota Batalion 315 yang bertugas di sebuah benteng berjarak sekitar 300 meter mulai menembaki mereka dan Lamberto Nunes tertembak mati.⁷¹³</p> |
| Viqueque | <p>Pada 13 Maret 1987, anggota unit Kopassus, Nanggala 15, diduga menembak dan membunuh Domingos da Costa yang sedang bersama ayahnya di kebun mereka di Beto-Abu (Ossoruá, Ossu).⁷¹⁴</p> <p>Suatu waktu pada 1988, Julio Amaral pergi bersama anjingnya untuk bekerja di sawah di Daibonubai (Uaibobo, Ossu). Tidak lama kemudian keluarganya mendengar bunyi tembakan, dan beberapa lama kemudian anjingnya kembali tanpa tuannya. Istrinya lalu pergi menyusul ke sawah dan menemukan suaminya sudah mati dengan secarik kain diikatkan di matanya. Jandanya mencurigai pasukan dari Batalion 328 dan 215 sebagai pelakunya karena mereka sedang dalam operasi di daerah tersebut pada waktu itu.⁷¹⁵</p> <p>Pada 6 Mei 1988, anggota-anggota Batalion 407 dilaporkan telah menembaki empat orang warga sipil di Ossu, mengakibatkan terbunuhnya seorang bernama Ernesto. Dua yang lainnya terluka dan dibawa ke pos Batalion 407, sementara orang keempat lolos ke hutan. Dua laki-laki yang tertangkap diinterogasi tentang keberadaan Falintil dan dilepaskan setelah lukanya dirawat.⁷¹⁶</p> |

| | |
|--------|---|
| Baucau | <p>Pada 1986 atau 1987, anggota-anggota Batalion 516 dari Lariguto (Asailatula) dilaporkan telah menembak mati Mateus do Rêgo dan seorang lelaki lain juga bernama Mateus. Setelah mereka dibunuh, mulut dan tenggorokan mereka dilaporkan ditebas dengan parang, dan kaki mereka diberondong peluru. Laki-laki ketiga, Abel Sico Lai, yang ikut bersama dua orang itu, dibawa dan menghilang. Ketiganya sedang menggali ubi di kebun mereka di <i>aldeia</i> Ro'o isi (Uai-Oli, Venilale) ketika tentara menembaki mereka.⁷¹⁷</p> <p>Juga pada September 1987, di Ossohuna (Baguia, Baucau), Domingos da Costa dibunuh oleh anggota Batalion 713 ketika ia berjalan ke kebunnya.⁷¹⁸</p> <p>Pada 1988, anggota-anggota Batalion Infanteri 713 dilaporkan telah memanggil Julião Ximenes dari Samagua (Tequinomata, Baguia) untuk ikut bersama mereka ke Indonesia. Ia tidak pernah lagi terlihat sesudah itu.⁷¹⁹</p> <p>Pada 12 Januari 1988, Francisco dan Domingos dilaporkan telah dibunuh oleh anggota-anggota Batalion 315 di Badoho'o (Venilale) dalam perjalanan mereka ke sawah.⁷²⁰</p> |
|--------|---|

Pembunuhan dan penghilangan lainnya (1985-1989)

598. Banyak korban di distrik-distrik di luar wilayah timur juga dijadikan sasaran karena kegiatan klandestin mereka atau karena hubungan kekeluargaan dengan orang-orang yang masih berada di hutan. Namun, korban-korban lainnya adalah petani-petani yang mulai menggarap lahan jauh dari pusat-pusat permukiman dan dibunuh secara sembarangan oleh anggota-anggota militer yang frustrasi atau curiga. Tabel berikut menunjukkan pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilaporkan pada Komisi selama periode ini.

Tabel 42: Ringkasan pelanggaran fatal sembarang terhadap penduduk sipil di wilayah Timur, 1985 - 1989

| Distrik | Ringkasan |
|----------|--|
| Manufahi | <p>Pada 15 Desember 1985, anggota-anggota Batalion 410 dilaporkan telah membunuh Julio Tilman di Betano karena ia dicurigai bekerja dengan Falintil.⁷²¹</p> <p>Pada Januari 1986, seorang anggota Hansip memukul Raimundo Sarmento, 58 tahun, di Raifusa (Betano, Same) karena ia dicurigai melakukan kontak dengan Falintil. Ia segera dilarikan ke rumah sakit namun dokternya mengatakan bahwa ia sudah sekarat. Ia dibawa pulang ke rumahnya dan meninggal seminggu kemudian.⁷²²</p> |
| Ainaro | <p>Pada 1986, anggota-anggota Hansip di Manetu (Maubisse) menangkap Abrão Rodrigues atas perintah kepala desa. Ia ditahan di kantor desa selama setahun dan selama itu ia terus-menerus dipukuli dan jarang diberi makan atau minum sampai akhirnya ia meninggal.⁷²³</p> <p>Pada September 1986, Julião de Araújo disuruh pergi berburu bersama kepala desa dan Hansip di Hato Udo. Dia tidak pernah kembali.⁷²⁴</p> |
| Ermera | <p>Pada 1987 anggota militer Indonesia diduga membunuh enam orang pemuda di Atara (Atsabe, Ermera).⁷²⁵</p> <p>Komisi menerima sebuah laporan yang tidak terkonfirmasi bahwa pada 1988, anggota militer Indonesia membakar Maubere Ketil dan Alberto hidup-hidup di <i>aldeia</i> Leimea, Sarin Balu (Letefoho).⁷²⁶</p> |
| Dili | <p>Pada 28 Agustus 1985, Antonio Simões dilaporkan dibunuh oleh anggota militer Indonesia di Kampung Alor. Ia disuruh oleh seorang prajurit Indonesia untuk pergi sekolah di Dili, tapi ia bertengkar dengan prajurit itu, lalu ia dibunuh.⁷²⁷</p> <p>Pada 17 Agustus 1987 Paul de Jesus, seorang anggota Hansip, ditembak di Vila Verde oleh anggota militer Indonesia yang mengetahui bahwa ayahnya pemimpin klandestin.⁷²⁸</p> |

Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh pasukan keamanan Indonesia, 1990-1998

599. Komisi menemukan bahwa dari akhir 1980-an sampai meletusnya kekerasan pada 1999, jauh lebih sedikit pembunuhan di luar hukum dan pembantaian yang dilaporkan, dengan pengecualian yang dramatis pada kejadian Pembantaian Santa Cruz pada 12 November 1991. Meskipun terjadi penurunan jumlah eksekusi yang dilaporkan, Komisi masih menerima kesaksian dari sebagian besar distrik tentang setidaknya 185 pembunuhan dan penghilangan selama periode ini. Militer Indonesia menanggapi aktivitas sejumlah kecil pejuang resistansi bersenjata dan gerakan klandestin yang semakin canggih dengan menjadikan warga sipil yang bersimpati pada resistansi sebagai sasaran penahanan, penyiksaan, penganiayaan, serta penghilangan paksa dan pembunuhan. Kesaksian-kesaksian berikut menunjukkan bahwa militer Indonesia terus meneror penduduk dan membunuh warga sipil, tetapi dengan menggunakan pendekatan yang lebih bersasaran dibandingkan yang dilakukan di masa lalu.

Pembantaian Santa Cruz (November 1991)

600. Pada pagi hari 12 November 1991, pasukan keamanan Indonesia menembaki seribu lebih demonstran yang berkumpul di perkuburan Santa Cruz di Dili. Demonstrasi menentang pendudukan Indonesia ini, yang dipimpin oleh kelompok-kelompok klandestin di Dili, adalah yang terbesar sejak 1975. Ketegangan di Dili meningkat dengan adanya pengumuman pada Agustus tentang rencana kunjungan delegasi parlemen Portugis. Pihak resistansi menyiapkan demonstrasi besar bertepatan dengan kunjungan yang direncanakan untuk 4 November tersebut. Tetapi, pada 25 Oktober parlemen Portugis membatalkan kunjungan tersebut sebagai protes atas permintaan Indonesia agar wartawan termasuk Jill Jolliffe dan Rui Araújo tidak diizinkan menyertai delegasi. Pembatalan kunjungan ini mengecewakan pihak resistansi, khususnya karena segala persiapan yang dilakukan oleh gerakan klandestin di seluruh negeri telah mengambil risiko terungkapnya jaringan klandestin kepada intelijen Indonesia. Menjelang akhir Oktober, gangguan militer terhadap para aktivis di Dili meningkat, yang memuncak dengan penyerbuan Gereja Motael pada 28 Oktober. Penyerbuan tersebut mengakibatkan tewasnya dua orang, seorang “intel” Timor-Leste dan seorang aktivis klandestin, Sebastião Gomes Rangel, yang pemakamannya dilakukan keesokan harinya. Pihak resistansi memutuskan menggunakan acara penaburan bunga untuk Sebastião Gomes pada 12 November—ketika Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan, Profesor Peter Kooijmans juga sedang berada di Dili—untuk berdemonstrasi menuntut kemerdekaan.

601. Sekitar 3.500 orang menghadiri misa di Gereja Motael yang berakhir sekitar pukul 07.00 pada 12 November. Sebuah prosesi kemudian dimulai dari gereja menuju ke Perkuburan Santa Cruz. Prosesi tersebut seketika berubah menjadi demonstrasi. Para aktivis kemerdekaan memampangkan spanduk-spanduk dan bendera-bendera kemerdekaan. Setelah melewati kantor gubernur, demonstrasi tersebut belok ke selatan di pertigaan di dekat markas Kodim karena jalan menuju Hotel Turismo diblokir oleh Brimob.

Sekitar pukul 07:15, di depan kantor Dharma Wanita, terjadi perkelahian di mana Mayor Andi Gerhan Lantara ditusuk dan asistennya, Prajurit Domingos, juga terluka. Leonardo de Araújo, seorang demonstran, mengatakan kepada Komisi bahwa ia juga ditusuk di kaki kanan oleh seorang berseragam loreng di dekat Kodim.[†] Ketika demonstrasi berlanjut, sebagian demonstran melemparkan batu ke Bank Summa dan markas Polwil di Jalan Bispo Madeiros. Demonstrasi tersebut belok ke timur di persimpangan Detasemen Polisi Militer dan Gereja Balide, dan tiba di perkuburan Santa Cruz sekitar pukul 07.50, di mana sekitar 500 orang demonstran lainnya sudah menunggu.

602. Pada 2004, Komisi mendapatkan enam dokumen militer Indonesia tentang kejadian-kejadian pada 12 November 1991 yang memerinci satuan-satuan mana yang dikerahkan untuk demonstrasi tersebut.[‡] Satuan-satuan tersebut di antaranya:

- Satu peleton Brimob 5486 di bawah komando Letnan Satu (Polisi) Maman Hermawan.
- Kompi Gabungan yang dipimpin oleh Letnan Dua Sugiman Mursanib yang terdiri atas satu peleton dari Brimob 5486 di bawah komando Letnan Dua Rudolf A. Roja dan tiga peleton dari Batalion 303 terdiri atas Kompi C di bawah komando Letnan Dua John Aritonang, Kompi D di bawah komando Letnan Handrianus Eddy Sunaryo, dan satu kompi lain yang komandannya tidak diketahui.
- Satu kelompok sekitar 24 prajurit dari Kompi A, Batalion 303 di bawah Kapten Yustin Dino. Ini termasuk setidaknya tiga 'Milsas' (orang Timor-Leste yang direkrut dari satuan-satuan pertahanan sipil, seperti Hansip, ke dalam struktur militer reguler), yakni Prajurit Dua Jorge Barreto, Domingos da Conceição, dan Financio Barreto.
- Satu detasemen antihuru-hara dari Batalion 744.

603. Penyelidikan Polisi Militer (POM) mengidentifikasi Sersan Satu Udin Syukur sebagai prajurit pertama yang melepaskan tembakan.[‡] Dalam pengadilannya, Sersan Syukur mengatakan bahwa ia bertengkar dengan para demonstran yang, menurut

.....
^{*} Wawancara dengan Leonardo de Araújo, 27 November 2004.

[†] Dua dokumen berasal dari Komando Wilayah Militer IX Udayana, [Komando Implementasi Operasi Timor Timur] (Kolakops), sebagai berikut: Laporan Khusus tentang Insiden 12 November 1991 di Dili, Timor Timur, No. Lapsus/26/XI/1991, 13 November 1991, sesudah 'Laporan Warouw Pertama'; Laporan Khusus tentang Penemuan Pengacau yang Terlibat dalam Demonstrasi Insiden 12 November 1991 di Santa Cruz, Dili, Timor Timur, Desember 1991, sesudah 'Laporan Warouw Kedua'. Empat dokumen berasal dari Komando Wilayah Militer IX Udayana, Detasemen Polisi Militer IX/4 sebagai berikut: Laporan Khusus tentang Ringkasan Singkat Penyelidikan Opsir-opsir Pengendalian Kerusuhan yang berhubungan dengan Demonstrasi oleh Grup Anti-Integrasi dan para Pendukungnya pada tanggal 12 November 1991, No. Lapsus/487/XI/1991, 26 November 1991, sesudah 'Laporan Polisi Militer Pertama'; Laporan tentang Penyelidikan Insiden 12 November 1991, No. R/488/XII/1991, Desember 1991, sesudah 'Laporan Polisi Militer Kedua'; Laporan Khusus tentang Hasil Penyelidikan Opsir-opsir Pengendalian Kerusuhan pada Demonstrasi 12 November 1991, No. Lapsus/03/XII/1991, Januari 1992, sesudah 'Laporan Polisi Militer Ketiga'; Berkas Penyelidikan Kasus Berhubungan dengan Kasus Sang Tertuduh: Sersan Satu Aloysius Rani, Denpasar, No. DPP-10/A-09/Komando Wilayah Polisi Militer IX/1992, April 1992. (terjemahan Inggris), sesudah 'Berkas Penyelidikan Kasus tentang Aloysius Rani'.

[‡] Laporan Polisi Militer ketiga.

klaimnya, membuatnya melepaskan tembakan ke arah samping demonstran tersebut dan tidak mengenai siapa pun. Marito Mota, koordinator kelompok pemuda klandestin Fitun, mengatakan kepada Komisi bahwa ia sedang berdiri di pertigaan berbaris bersama rekan-rekan demonstrannya menghadap pasukan keamanan. Marito Mota mengatakan bahwa ia melihat salah seorang demonstran mendekati para prajurit tersebut dan berusaha mengatakan sesuatu. Orang itu adalah yang pertama ditembak dan sesudah itu para demonstran mulai lari berpecah karena panik.*

604. Tak lama kemudian terjadi penembakan intens selama beberapa waktu. Russell Anderson, salah satu saksi mata asing pembantaian tersebut, menggambarkan bagaimana penembakan oleh para prajurit tersebut tiba-tiba meningkat.†

Saya dan Bob Muntz memutuskan kita sebaiknya pergi. Saya telah mengambil sepuluh langkah cepat menuju utara sepanjang tembok makam dan melirik ke belakang melihat helm-helm barisan depan militer bergerak naik-turun, berlari-lari, atau berbaris menuju kerumunan. Kerumunan tersebut mulai berjalan mundur, menjauh, sebagian sudah berlari.

Tiba-tiba beberapa tembakan terdengar dilanjutkan dengan berondongan tembakan senapan otomatis yang berlangsung selama dua sampai tiga menit. Kedengarannya seperti kelimabelas orang di barisan depan tersebut dengan mantap menarik pelatuk. Mereka menembak langsung ke arah kerumunan.

605. Laporan Polisi Militer Ketiga menyimpulkan bahwa “oknum-oknum” dari kedua peleton Batalion 303, di bawah Letnan Dua Mursanib, bersama dengan kompi Batalion 303 dari Taibessi, mengambil-alih peleton Brimob tersebut karena Brimob sepertinya ragu-ragu bertindak. “Oknum-oknum” ini membentuk sebuah satuan di depan peleton Brimob. Mursanib memerintahkan dua tembakan peringatan, tapi pada saat tembakan kedua, pasukan keamanan, termasuk tiga orang Timor-Leste yang diperbantukan untuk Batalion 303, sudah mulai menembak langsung ke arah kerumunan. Jacinto Alves, seorang aktivis klandestin yang terlibat dalam mengorganisasi demonstrasi tersebut, mendengar perintah untuk menembak ketika ia melewati pasukan yang datang dari Taibessi. Bertahun-tahun kemudian, ia menceritakan kepada penyelidik PBB:

Saat sampai di sebuah jembatan yang disebut ‘Ponte My Friend’, yang terletak sekitar 100 meter dari perkuburan tersebut, sekelompok prajurit Indonesia, bertelanjang dada dan bersenjata, melewati saya dan berhenti dua meter di depan. Saya mengidentifikasi mereka sebagai anggota-anggota Batalion 744 berdasar arah mereka datang. Salah satu dari mereka, saya tidak mengenalnya, menginstruksikan

* Wawancara dengan Marito Mota, Bairo Pite, Dili 28 November 2004.

† Russell Anderson, Statement on the Massacre in East Timor on 12 November 1991, submisi kepada Joint Parliamentary Committee for Trade and Defence (Australia), 2 Desember 1991.

rekan-rekannya untuk menembak para demonstran di tempat. Saya tidak mengira perintah tersebut akan dijalankan karena adanya pelapor HAM [PBB] di Dili saat itu...Setelah saya mendengar perintah tersebut saya berputar dan mulai menuju tempat tinggal saya. Setelah berjalan sekitar 200 meter, saya mendengar suara tembakan selama sekitar lima menit disusul dengan tembakan-tembakan tunggal yang berlangsung lama bahkan setelah saya sampai di rumah. ⁷²⁹

606. Pasukan yang bertelanjang dada yang dilihat Jacinto Alves ternyata adalah sekelompok prajurit di bawah komando Yustin Dino dari Batalion 303. Sekurangnya empat orang anggota Brimob memberi kesaksian pada para penyelidik militer bahwa mereka melihat tembakan-tembakan dilakukan oleh prajurit-prajurit bertelanjang dada ini.⁷³⁰ Para prajurit juga mulai menembak dari dalam Taman Makam Pahlawan Seroja yang berseberangan langsung dengan Perkuburan Santa Cruz. Marcio Cipriano Gonçalves memberitahu Komisi bahwa ia melihat prajurit-prajurit di dalam Taman Makam Pahlawan mengarahkan senjata mereka kepada para demonstran dan bahwa ia hampir terkena peluru yang ditembakkan dari arah itu.⁷³¹

607. Banyak saksi mengingat bahwa mereka terus mendengar tembakan selama beberapa waktu.⁷³² Simplicio Celestino de Deus mengatakan kepada Komisi bahwa banyak orang terbunuh pada saat berondongan penembakan utama, tapi juga bahwa banyak lainnya yang juga terbunuh dengan berbagai cara lain segera setelah kejadian tersebut.

Ketika saya sampai di perkuburan senjata-senjata tersebut masih ditembakkan dan berlanjut selama sekitar sepuluh menit. Di dalam perkuburan saya mencari tempat sembunyi. Kemudian pihak militer menyerbu masuk, memukuli para korban dengan senapan dan menendang mereka. Banyak orang terbunuh di dalam perkuburan, tapi lebih banyak lagi dibunuh di luar perkuburan ketika mereka sedang melarikan diri atau dibawa dari rumah-rumah mereka atau tempat persembunyian yang lain, lalu dibunuh.

Pihak militer menemukan saya, memukuli saya, dan melukai telinga saya. Kemudian, seorang polisi datang dan benar-benar memotong telinga saya sampai putus...Karena banyaknya darah yang keluar mereka melempar saya ke dalam sebuah truk militer Indonesia yang penuh dengan mayat-mayat. Ketika truk mulai bergerak saya melihat ternyata salah satu orang dalam truk itu masih hidup. Dia mencoba bangun dan meminta air pada para penjaga. Bukannya memberikan air, prajurit itu justru memotong lehernya dengan bayonet. ⁷³³

608. Berkas-berkas medis yang diperlihatkan di pengadilan atas Gregorio da Cunha Saldanha, seorang pemimpin klandestin yang terlibat dalam mengorganisasi demonstrasi 12 November itu, menyebut 19 orang tewas dan 91 orang terluka. Berkas-berkas itu juga mengindikasikan pola umum penembakan tersebut.⁷³⁴

Dari 17 korban penembakan di perkuburan, enam orang terkena peluru yang ditembakkan dari arah depan yang bersarang di bagian atas badan, sebagian besar di sekitar dada. Ini menunjukkan penembakan disengaja yang diarahkan ke badan para demonstran. Dari 91 korban yang terluka, 43 mengalami luka tembak, 21 di antaranya dengan luka tembak dari belakang dan mengenai punggung, pantat, belakang kaki mereka, dan leher.

Kematian Kamal Bamadhaj

Kamal bin Ahmed Bamadhaj, 21, adalah satu-satunya orang asing yang tewas di Dili pada 12 November 1991. Ia sedang menonton demonstrasi di Perkuburan Santa Cruz bersama enam orang asing lainnya. Kemungkinan besar ia berdiri dekat barisan depan para demonstran, ketika pasukan keamanan berkumpul di pertigaan. Entah bagaimana dia berhasil melarikan diri dari pembantaian tersebut dan sampai ke Jalan Bispo Madeiros di mana dia kemudian ditembak oleh patroli yang lewat. Pengadilan militer Indonesia mengadili dua prajurit Timor berpangkat rendah—Prajurit Dua Afonso de Jesus dan Prajurit Dua Mateus Maia—atas dakwaan yang terkait dengan kematian Kamal.

Helen Todd, ibu Kamal, berbicara tentang kematian Kamal di Audiensi Publik CAVR tentang Pembantaian:

Kamal adalah siswa yang lahir dan berpendidikan Malaysia. Dia seorang Muslim. Pada saat Pembantaian Santa Cruz, Kamal menjadi mahasiswa tingkat dua di Australia. Ketika dia pindah ke Australia untuk melanjutkan studi dia sangat terkejut mendengar situasi di Timor. Di Malaysia, dia tidak pernah mendengar apa pun tentang Timor-Leste.

Kamal tidak ditembak di Santa Cruz. Setelah penembakan di perkuburan itu, dia berjalan kaki sepanjang jalan pasar lama. Seperti Anda ketahui, sebelumnya ada seorang agen intel yang ditusuk. Satuan ABRI yang membawa agen itu ke rumah sakit sedang dalam perjalanan kembali dan melihat Kamal berjalan seorang diri lalu menembaknya. Seorang anggota Palang Merah Internasional berusaha membawa Kamal yang berdarah, ke rumah sakit umum, tapi tidak diterima dan diharuskan pergi ke rumah sakit militer, sehingga kehilangan banyak waktu berharga. Kamal meninggal setelah masuk karena kehilangan banyak darah. Kematian Kamal adalah satu bagian kecil dalam perjuangan ribuan orang. Sesuatu yang kecil, tapi Anda akan mengerti bahwa hal ini penting bagi saya.

Terjadi banyak sekali kebohongan setelah pembunuhan Kamal. Max Stahl sangat gamblang tentang kebohongan-kebohongan yang

diceritakan setelah pembantaian Santa Cruz. Saya dapat bersaksi bahwa ini benar. Selama tiga hari pihak Indonesia menyangkal bahwa ada warga asing yang terbunuh. Kemudian laporan resmi Indonesia adalah bahwa Kamal terbunuh dalam baku tembak. Kemudian dikatakan bahwa dia adalah semacam turis bodoh, yang terbunuh karena dia seharusnya tidak berada di sana.

Pemerintah Selandia Baru awalnya sangat membantu mengupayakan pengambilan jenazah Kamal, tapi setelah ini selesai mereka kembali seperti biasa, melakukan apa pun asal Indonesia senang. Malaysia hampir tidak mengakui pembunuhan tersebut. Koran berbahasa Inggris utama menulis tentang pembunuhan tersebut, dengan tajuk umum bahwa anak muda seharusnya tidak ikut-ikutan dalam urusan politik, karena kalau terlibat entah mengapa mereka dianggap seperti cari-cari masalah.

Palang Merah di Dili sangat membantu. Kamal awalnya dikubur di sebuah makam tanpa nama di Hera. Berkat usaha-usaha dari perwakilan Palang Merah, Anton Manti, kami bisa memindahkan jenazahnya dan memakamkannya di Malaysia.

*Tahun ini, pada peringatan [peristiwa Santa Cruz], saya berjalan ke tempat Kamal ditembak. Orang-orang keluar untuk memberitahu saya bahwa lokasinya berada sedikit lebih jauh lagi di jalan tersebut. Belakangan hari itu, saya kembali ke tempat itu. Seseorang telah datang dan menaruh bunga-bunga dan lilin-lilin di tempat tersebut. Saya berterima kasih.**

Dugaan pembunuhan di Rumah sakit Wirahusada

609. Pada 1994, dua orang keluar dan mengklaim bahwa mereka menyaksikan pembunuhan orang-orang yang dibawa ke Rumah sakit militer Wirahusada setelah terluka di Santa Cruz. Ketika terjadi pembantaian, Aviano Antonio Faria adalah siswa SMA Santo Yosef dan João Antonio Dias adalah teknisi laboratorium di Rumah sakit Wirahusada. Kedua orang tersebut diselundupkan keluar Timor-Leste dan bersaksi pada sesi ke-50 Komisi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1994. Komisi tersebut mewawancarai kedua saksi tersebut dan seorang saksi baru, Inocêncio da Costa Maria Freitas, yang bekerja pada bagian intelijen Kodim Dili.

610. Aviano Antonio Faria memberitahu Komisi HAM PBB bahwa setelah ia terluka di Santa Cruz, ia dibawa dari perkuburan ke Rumah sakit Wirahusada dan tidak lama kemudian ia ditempatkan di kamar mayat.⁷³⁵ Dua orang tentara Indonesia masuk ke ruangan tersebut. Salah satu membawa batu besar dan seorang lagi membawa dua botol plastik yang berisi air dan sejenis obat. Tentara yang membawa

.....
* Helen Todd, kesaksian oral diberikan pada Audiensi Publik CAVR tentang pembantaian, Kantor Publik CAVR di Dili, 19-21 November 2003.

batu besar menjatuhkan batu tersebut ke kepala orang-orang yang terluka parah. Ketika tiba giliran Faria, ia tiba-tiba berdiri dan berbohong pada tentara tersebut bahwa ia adalah seorang informan Kopassus, yang ditugasi untuk memonitor demonstrasi tersebut. Kedua tentara itu membiarkannya pergi, tapi sebelum itu mereka menyuruhnya minum obat tersebut. Setelah obat itu menyebabkannya muntah, ia dibawa ke rumah sakit dan menerima perawatan. Pada malam hari 12 November, tentara datang ke ruangan tempat Aviano Antonio Faria dan pasien-pasien lain sedang tidur. Mereka bertanya siapa di antara mereka yang datang dari kamar mayat. Faria tetap diam, dan mereka tidak membawanya.

611. João Antonio Dias memberitahu Komisi bahwa tablet-tablet formalin diberikan kepada orang-orang yang terluka.⁷³⁶ Ia memberitahu Komisi bahwa ia disuruh membantu mengambil mayat-mayat yang dibawa ke rumah sakit dengan truk-truk. Ini membuatnya mual dan ia pergi ke kamar mandi laboratorium di mana ia mendengar percakapan antara pengawasnya dan empat orang prajurit yang datang ke laboratorium untuk mengambil asam sulfat. Para prajurit itu berkata bahwa mereka ingin membunuh orang-orang yang terluka, secara cepat dan diam-diam. Pengawasnya mengatakan pada mereka bahwa orang-orang akan berteriak jika mereka diberi asam sulfat, jadi tentara itu pergi dan kembali lagi membawa obat lain. Ketika obat ini diberikan pada para korban, banyak yang berteriak dan kemudian menjadi diam. Tentara-tentara itu mengambil pakaian dan sepatu para korban yang sudah mati dan membakar mayat-mayat mereka di depan kamar mayat. Kemudian sebuah truk air datang dan menyirami tanah tersebut.

612. Inocêncio da Costa Maria Freitas, seorang anggota seksi intelijen Kodim, melaporkan pada Komisi bahwa dia datang ke Rumah sakit Wirahusada pagi itu membawa Mayor Gerhan Lantara yang terluka.⁷³⁷ Ketika ia di situ, Kamal Bamadhaj dan asisten Gerhan Lantara, Prajurit Domingos, dibawa ke rumah sakit. Truk-truk Hino mulai berdatangan dan ia melihat sekitar 200 mayat dibawa masuk ke rumah sakit. Ia pergi ke kamar mayat dan di sana ia melihat dua tentara Indonesia meremukkan dengan sebungkah batu kepala orang-orang yang terluka yang tergeletak di lantai.

Kebersalahan

613. Penyelidikan-penyelidikan militer dan sipil Indonesia menggambarkan para demonstran sebagai orang beringas dan mengklaim mereka bersenjatakan senapan, pistol, granat, pedang, dan pisau. Kedua penyelidikan tersebut juga mengklaim bahwa para demonstran melempar sebuah granat dan mencoba merebut senjata api dari para prajurit. Seorang saksi memberitahu Komisi bahwa sebagian demonstran membawa granat.⁷³⁸ Fernando Tilman, seorang saksi di pengadilan Gregorio da Cunha Saldanha, dicatat pernah bersaksi di pengadilan bahwa ia melihat seorang demonstran, Atino Brewok, menembakkan senjata dan melihat dua demonstran lain membawa senapan.⁷³⁹ Akan tetapi, ia memberitahu Komisi bahwa yang ia katakan di pengadilan tidak benar.⁷⁴⁰ Penyelidikan-penyelidikan Indonesia tidak memberikan bukti seperti foto atau film yang menunjukkan demonstran bersenjata.

Yang menambah kesan bahwa tuduhan-tuduhan ini direayasa adalah kenyataan bahwa daftar senjata-senjata yang konon telah disita oleh aparat keamanan Indonesia sering berubah.

614. Karena pembantaian ini direkam dalam film oleh wartawan televisi Inggris Max Stahl, dan diputar di seluruh dunia, terjadi kemarahan internasional yang luarbiasa, yang tidak dapat ditampik oleh pemerintah Indonesia. Lembaga intelijen strategis militer, Bais, langsung melaksanakan penyelidikan internal, tapi tidak pernah mengumumkan temuan-temuannya.⁷⁴¹ Sebuah Komisi Penyelidik Nasional (KPN) ditunjuk oleh Presiden Soeharto untuk menjalankan investigasi. Di dalam laporan awalnya, yang dikeluarkan pada 26 Desember 1991, sebagian besar kesalahan dikenakan pada para demonstran. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa tanggapan para aparat keamanan Indonesia adalah reaksi untuk membela diri dan, karena terjadi tanpa perintah dari atas, mengakibatkan penembakan yang berlebihan ke arah para demonstran.⁷⁴² Laporan lengkapnya tidak diumumkan. Pada 1992, 10 anggota pasukan keamanan berpangkat rendah diadili di mahkamah militer dan menerima hukuman antara delapan sampai 18 bulan. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa jumlah kematian yang terkonfirmasi adalah 19 orang dan 56 orang dinyatakan hilang per 29 November 1991.⁷⁴³ Akan tetapi, sumber-sumber lain mengatakan bahwa tingkat kematian jauh lebih tinggi. Sebagai contoh, daftar nama korban yang dikumpulkan oleh dua LSM Portugis, yang diterbitkan pada 1993, berisi 271 nama korban tewas, 382 luka-luka, dan 250 orang hilang.⁷⁴⁴

615. Jumlah korban luka di daftar yang disusun LSM-LSM Portugis tersebut dikuatkan oleh penyelidikan internal militer Indonesia, yang menyatakan bahwa jumlah orang terluka yang dibawa ke Rumah sakit Wirahusada berkisar 400 orang.⁷⁴⁵ Dalam suatu survei singkat terhadap kampung-kampung terpilih di Dili, Komisi dapat memastikan bahwa keberadaan 59 orang dalam daftar orang-orang hilang versi Portugis tersebut tetap tidak diketahui. Selain itu Komisi menerima nama 18 orang lainnya melalui proses pengambilan pernyataan. Dengan mencoret nama-nama ganda yang diberikan kepada Komisi melalui kedua proses tersebut, Komisi berhasil mengumpulkan jumlah total 72 nama orang yang hilang sejak November 1991. Jelas bagi Komisi ini bahwa jumlah keseluruhan korban hilang pastinya jauh lebih tinggi. Survei Komisi memang tidak bisa dikatakan lengkap, karena hanya mencakup sedikit kampung di Dili dan tidak mengikutkan kampung-kampung di dekat perkuburan Santa Cruz itu sendiri. Selain itu, jelas bahwa banyak demonstran berasal dari daerah di luar Dili dan walau diketahui bahwa sebagian dari mereka juga dibunuh atau "hilang", jumlahnya tidak diketahui.⁷⁴⁶ Komisi tidak bisa menentukan berapa persisnya yang masih hilang, namun Komisi yakin bahwa angka 200 bukanlah perkiraan yang tidak masuk akal.

616. Komisi juga menerima beberapa laporan eksekusi di luar hukum di luar Dili seputar tanggal peristiwa Santa Cruz. Di Sorolau (Ainaro, Ainaro) empat orang aktivis klandestin dibunuh oleh tentara yang diketahui adalah anggota Kopassus dan Milsas Timor Timur.⁷⁴⁷ Di Maubisse (Ainaro) 14 laki-laki ditangkap Sukarelawan Timor Timur yang bertindak atas perintah Koramil Maubisse. Mereka dibawa

ke Koramil setempat di mana mereka diikat, dipukul, dan diinterogasi mengenai hubungan-hubungan klandestinnnya. Dua orang dari kelompok tersebut, Angelino Martins dan Joao, meninggal akibat pemukulan itu.⁷⁴⁸

617. Komisi merasa bahwa sebuah survei yang lebih menyeluruh dari yang sudah dilakukan masih diperlukan. Komisi mendapatkan laporan yang dapat dipercaya bahwa terdapat sekurangnya satu kuburan massal di Tibar dan mungkin satu lagi di Hera, dan yakin bahwa dibutuhkan penyelidikan yang lebih menyeluruh.⁷⁴⁹ Komisi mengingat bahwa dalam laporannya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai misinya ke Indonesia dan Timor-Leste, Pelapor Khusus tentang Eksekusi di Luar Hukum, Seketika, atau Sewenang-wenang, Bacre Waly Ndiaye, mengutip Pasal 17, Paragraf 1 Deklarasi tentang Perlindungan semua Orang dari Penghilangan Paksa, yang menyatakan: "Segala tindakan yang merupakan penghilangan paksa harus dipandang sebagai pelanggaran yang terus berlanjut selagi pelaku terus menyembunyikan nasib dan keberadaan orang-orang yang telah hilang dan fakta-fakta tersebut tetap tidak dijelaskan."⁷⁵⁰

Studi kasus: Penyelidikan oleh Indonesia terhadap peristiwa di Perkuburan Santa Cruz 12 November 1991.

Pendahuluan

618. Ketika rekaman film tentang pembantaian di Santa Cruz⁷ ditayangkan kepada pemirsa di seluruh dunia, rekaman itu telah memicu kecaman luarbiasa dari dunia internasional terhadap praktik-praktik militer Indonesia di Timor-Leste. Penayangan itu telah mengakibatkan tingkat tekanan terhadap Indonesia yang tak ada duanya menyangkut aksi-aksi angkatan bersenjata di Timor-Leste. Walaupun begitu, penelitian yang dipaparkan dalam bagian ini menyatakan bahwa, bahkan ketika berhadapan dengan tuntutan keras dunia internasional untuk mengadili mereka yang telah membunuh para demonstran tak bersenjata, praktik-praktik institusional ABRI/TNI menyebabkan sebagian besar pelaku yang paling bertanggung jawab secara efektif bebas dari hukuman..

619. Sebagaimana dilaporkan dalam Bab ini, sejumlah besar demonstran tak bersenjata dibunuh oleh anggota militer Indonesia yang bersenjata lengkap dalam apa yang kemudian dikenal dengan Pembantaian Santa Cruz. Ini termasuk penembakan penduduk sipil dari belakang saat mereka melarikan diri, menikam penduduk sipil hingga meninggal, atau membunuh yang terluka yang tak berdaya dengan memukuli kepala mereka. Namun demikian, serangkaian penyelidikan menyusul peristiwa itu, yang dilakukan oleh polisi sipil, polisi

.....
* *Cameraman Max Stahl* memfilamkan demonstrasi itu dan reaksi dari militer Indonesia pada 12 November 1991. Film itu diseludupkan keluar Timor-Leste dalam beberapa hari dan disiarkan oleh jaringan-jaringan televisi di seluruh dunia. Komisi telah menyelidiki rekaman ini dan mempunyai sejumlah *copy* sebagai arsip. José Ramos Horta menyatakan kepada Komisi bahwa rekaman film ini telah mengubah persepsi dunia internasional tentang situasi di Timor-Leste (José Ramos Horta, Pidato Penutupan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Kelaparan dan Pemandahan Paksa, 28-29 Juli 2003).

militer, dan Komando Daerah Militer setempat, malahan berujung pada suatu hasil di mana para demonstran, yang merupakan korban pembantaian, menderita hukuman berkepanjangan. Para demonstran secara acak dibunuh, dikumpulkan, ditangkap, atau menghadapi pengadilan yang tidak adil yang dirancang untuk menjamin dijatuhkannya hukuman dan memastikan hukuman penjara yang lama.

620. Penyelidikan-penyelidikan itu tidak dilaksanakan oleh otoritas yang independen, melainkan oleh orang-orang yang secara institusional berhubungan dengan mereka yang diselidiki. Dengan demikian penyelidikan-penyelidikan tersebut dirancang untuk mengancam para demonstran dan pada gilirannya membebaskan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan itu. Pada akhirnya, para perwira militer yang terlibat langsung dalam penembakan atau yang memerintahkan pasukan menembaki para demonstran tak bersenjata dilindungi dan hanya beberapa perwira berpangkat rendah yang menghadapi pengadilan militer dengan dakwaan yang relatif ringan.

Latar belakang

621. Peristiwa-peristiwa yang menjelang dan termasuk peristiwa pembunuhan di Perkuburan Santa Cruz pada 12 November 1991, juga pengadilan terhadap para demonstran, dijelaskan lagi secara terperinci di dalam bagian lain Laporan Akhir ini.^{*} Pelapor Khusus PBB menyangkut Pembunuhan di Luar Hukum, Seketika, atau Sewenang-wenang, Bacre Waly Ndiaye (Senegal) mengunjungi Indonesia dan Timor-Leste sejak 3 sampai 13 Juli 1994 dan mencermati peristiwa-peristiwa pada pembantaian di Santa Cruz. Ia menyampaikan laporannya kepada Komisi HAM PBB pada Februari 1995.⁷⁵¹ Bukti yang diberikan kepada Komisi pada umumnya membenarkan berbagai temuan Pelapor Khusus PBB Ndiaye dalam laporannya pada 1994 tentang pembunuhan di luar hukum di Santa Cruz.

622. Secara khusus, Pelapor Khusus PBB menemukan bahwa:

- Arak-arakan itu merupakan demonstrasi perbedaan politik yang berlangsung secara damai.
- Klaim sejumlah perwira bahwa pasukan keamanan menembak karena membela diri dan telah menghormati prinsip-prinsip kelayakan (*necessity*) dan proporsionalitas penggunaan kekuatan senjata, tidak berdasar atau tidak terbukti di lapangan.
- Pasukan keamanan telah menggunakan kekuatan yang tak selayaknya, melampaui batas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka
- Pasukan keamanan telah memperoleh informasi sebelumnya mengenai persiapan untuk demonstrasi tersebut.
- Para demonstran tidak membawa senjataapi.

^{*} Secara khusus lihat Bab 7.6: Pengadilan politik, Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan, dan Bagian 3.: Sejarah Konflik.

- Satu-satunya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para demonstran adalah penikaman terhadap Mayor Andi Gerhan Lantara dan asistennya, Prajurit Domingos, yang terjadi beberapa saat sebelum kerumunan itu mencapai perkuburan Santa Cruz.
- Tidak ada anggota pasukan keamanan yang terbunuh di atau sekitar perkuburan, lokasi penembakan yang mereka lakukan.⁷⁵²

623. Standar-standar internasional yang baku untuk peninjauan investigasi-investigasi yang melibatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran akan hak hidup, tercantum dalam Prinsip-prinsip tentang Pencegahan dan Penyelidikan yang Efektif terhadap Eksekusi di Luar Hukum, Seketika, dan Sewenang-wenang.⁷⁵³

624. Menurut prinsip-prinsip ini, pembantaian di Santa Cruz mengharuskan suatu penyelidikan yang menyeluruh, cepat, dan tidak memihak. Sesuai dengan Prinsip Nomor 9, tujuan penyelidikan tersebut harus:

[U]ntuk memastikan sebab, cara, dan waktu kematian, orang [atau orang-orang] yang bertanggung jawab, dan pola-pola atau praktik yang mungkin telah menyebabkan kematian tersebut. Penyelidikan ini harus termasuk melakukan otopsi, pengumpulan dan analisis terhadap semua bukti fisik dan dokumen serta pernyataan dari para saksi secara memadai.

625. Atas dasar ini, berbagai penyelidikan yang dilakukan oleh Indonesia seharusnya berusaha untuk:

- Mengidentifikasi angka-angka dan identitas dari mereka yang meninggal atau hilang.
- Membedakan antara berbagai alasan kematian: meninggal secara alami, meninggal dalam kecelakaan, bunuh diri, dan dibunuh.
- Memberikan penilaian apakah hak seseorang untuk hidup direnggut secara tidak sah, yaitu, direnggut secara sewenang-wenang, untuk suatu alasan yang tidak berdasar hukum, atau dengan suatu cara yang tidak semestinya, atau direnggut seketika.
- Memastikan hingga suatu tingkat tertentu orang dan/atau komando yang bertanggung jawab atas orang [orang-orang] yang diselidiki agar dapat merekomendasikan tindakan selanjutnya untuk mencari tahu alasan dari tindakan tersebut.

626. Seksi ini menguraikan sampai di mana berbagai penyelidikan dan tindakan yang dilakukan oleh otoritas-otoritas Indonesia dalam menanggapi pembunuhan di Perkuburan Santa Cruz telah memenuhi standar-standar ini dan dengan demikian melimpahkan tugas kepada Indonesia untuk mengadili para pelaku melalui suatu proses penyelidikan, pengadilan, dan penghukuman yang sungguh-sungguh terhadap para pelaku.

627. Komisi telah mempertimbangkan:

- Penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sipil di Timor-Leste.
- Penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh pihak militer di Timor-Leste.
- Penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polisi militer terhadap tindakan anggota militer pada peristiwa tersebut.
- Penyelidikan oleh Komisi Penyelidik Nasional (KPN).
- Tindakan yang diambil terhadap para anggota angkatan bersenjata, termasuk pengadilan terhadap para anggota angkatan bersenjata.

*Penyelidikan polisi sipil**

628. Sistem hukum Indonesia tidak menjamin kuasa polisi atas militer, dan dengan demikian polisi hanya dapat menyelidiki tindak-tanduk yang dilakukan oleh warga sipil. Dalam kasus ini warga sipil adalah para demonstran. Warga sipil pula yang menjadi korban kejahatan yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan. Bagaimana pun, polisi perlu melakukan investigasi atas seluruh kejadian secara adil dan sungguh-sungguh sebelum mereka memutuskan bahwa pengadilan kriminal terhadap para demonstran memang diperlukan.

629. Jelas bahwa polisi melakukan penyelidikan dalam skala besar. Pada 13 Desember Kepala Kepolisian Wilayah Timor Timur, Drs. Ishak Kodijat, secara resmi memulai penyelidikan dengan satu tim yang beranggotakan 28 orang.⁷⁵⁴ Namun demikian, penyelidikan ini sejak awal terpusat pada usaha membawa para demonstran ke pengadilan. Tentu saja, pada hari terjadinya demonstrasi, sebelum penyelidikan dimulai, polisi sipil telah menyimpulkan bahwa kejahatan-kejahatan subversif telah dilakukan.⁷⁵⁵ Sebagai hasilnya, penyelidikan tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh maupun adil. Ketidakberpihakan polisi lebih jauh lagi dikuatkan dengan kenyataan bahwa kepolisian merupakan bagian dari aparat angkatan bersenjata Indonesia.

630. Kegagalan-kegagalan dalam penyelidikan terhadap perilaku para demonstran telah didiskusikan secara terperinci di dalam Bab 7.6: Pengadilan politik. Bukti-bukti yang telah diteliti oleh Komisi, termasuk ratusan berkas pengadilan dan bukti dari para saksi, jelas memperlihatkan bahwa jalannya persidangan telah dirancang dan dijalankan untuk memastikan dijatuhkannya hukuman terhadap para demonstran yang didakwa. Banyak pengakuan diperoleh melalui penyiksaan, bukti-bukti dipalsukan, dalam sebagian besar kasus tidak ada saksi meringankan yang dihadapkan oleh para pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan, tidak satupun mereka yang terdakwa dibebaskan, dan tidak satupun banding yang berhasil. Berbagai temuan Komisi antara lain sebagai berikut:

* Komisi menggunakan istilah ini untuk membedakan 'polisi sipil' dari 'polisi militer'. Pada waktu terjadinya insiden hingga 1999, polisi sipil maupun polisi militer merupakan bagian angkatan bersenjata.

- Penyelidikan diarahkan untuk menghukum para pengatur demonstrasi atas penentangan terang-terangan mereka, untuk kemudian menyalahkan para demonstran atas terjadinya peristiwa di permakaman tersebut. Berbagai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Persidangan menunjukkan bahwa pihak berwenang berusaha keras memaparkan perincian mengenai tuduhan tindakan brutal yang dilakukan para demonstran dan bagaimana para petugas keamanan diserang dan dipancing untuk menembak membela diri, sementara menghindari dari isu mengenai apa yang sebenarnya terjadi di permakaman pada waktu berurusan dengan para demonstran atau pengatur demonstrasi.
- Tidak ada bukti dalam berkas-berkas tersangka yang menyatakan bahwa penyidik polisi hadir, apalagi mengamankan dan melaksanakan penyelidikan forensik, di tempat kejadian pembunuhan massal di permakaman Santa Cruz.* Lebih lanjut, berbagai bahan yang diteliti oleh Komisi juga tidak menunjukkan telah dilakukannya penyelidikan atas tuduhan penusukan yang terjadi atas dua anggota ABRI di luar Kodim.†
- Pengakuan yang dilakukan oleh tersangka dalam pemeriksaan dilakukan di bawah tekanan, terkadang siksaan, dan tanpa kehadiran penasihat hukum yang harus mendampingi. (lihat Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan).
- Berkas-berkas pengadilan berisi laporan medis dua orang anggota ABRI yang diserang oleh para demonstran tetapi tidak ada sedikit pun catatan mengenai para demonstran yang terbunuh atau terluka oleh pasukan keamanan. Bahkan tidak ada perincian tentang 19 orang (18 orang yang tidak teridentifikasi ditambah seorang mahasiswa Malaysia, Kamal Bamadhaj) yang diduga pihak otoritas sebagai orang-orang yang terbunuh pada hari itu. Pelapor Khusus PBB Ndiaye menyimpulkan sebagai berikut:

* Berkas mengenai Santa Cruz di Pengadilan Negeri Dili mengungkapkan bahwa pada 12 November polisi mengumpulkan benda-benda yang terkait dengan pelemparan batu terhadap Bank Summa dan Kepolisian Wilayah (Polwil) lama: Achmad Bey, Kabag Serse, mengeluarkan perintah untuk menyita seongkah batu dan pecahan kaca dari Bank Summa dan lima buah batu dan pecahan kaca dari Polwil lama. (Surat Perintah Penyitaan, No. Pol. SPPNY/illegible/XI/1991/Serse, 12 November 1991, Kabag Serse, Achmad Bey). Pada keesokan harinya, polisi memberitahukan Pengadilan Negeri Dili bahwa mereka telah mengidentifikasi Jose Francisco da Costa berkaitan dengan pelemparan batu dan berusaha menyita batu dan pecahan kaca sesuai aturan yang berlaku. (Mohon Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, No. Pol. B/1294/XI/1991/Serse). Menurut KUHAP, penyitaan bukti memerlukan surat perintah pengadilan. Penyitaan yang segera dilakukan memerlukan persetujuan retrospektif dari pengadilan. Surat ini diberikan oleh Pengadilan Negeri Dili pada 17 Desember 1991 dalam Penetapan No. 154/Pen.Pid/1991/PN.DIL. Cara yang sama dilakukan terhadap dengan José Bareto, yang dituduh telah melemparkan batu-batu ke Polwil lama. (Mohon Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, No. Pol. B/1243/XI/1991/Serse). Persetujuan diberikan oleh Pengadilan Negeri Dili pada tanggal 17 Desember 1991 dalam Penetapan No. 153/Pen. Pid/1991/PN.DIL.

† Namun demikian, Laporan Warouw Kedua, *infra*, menyatakan bahwa Mayor Gerhan Lantara ditikam oleh Mariano dan Siko (saksi Julio da Costa) dan Prajurit Dominggos da Costa diserang oleh Francisco Amaral, hal.4.

Menurut Kepala Kepolisian Wilayah Timor Timur, mayat ke-19 korban yang telah dikenali dikubur di Hera pada 13 November, sehari setelah pembantaian tersebut. Tidak dilakukan otopsi yang selayaknya, tidak ada foto tubuh korban yang diambil, dan, sampai hari ini, 18 mayat masih belum teridentifikasi. Tidak diketahui langkah-langkah apa yang telah diambil terkait dengan dugaan bahwa mayat-mayat korban telah dikubur dalam kuburan-kuburan massal. Oleh karena itu, Pelapor Khusus tersebut memperoleh kesimpulan yang sama dengan KPN, melaporkan bahwa “penanganan terhadap mereka yang mati dilakukan secara sembarangan, karena meskipun telah dilakukan *visum et repertums* jasad-jasad tersebut tidak teridentifikasi secara layak. Keluarga atau sahabat hampir tidak diberi kesempatan untuk mengidentifikasi jasad-jasad tersebut.”^{*}

- Tidak ada satu foto pun tentang demonstran-demonstran yang bersenjata, melakukan kekerasan dan “brutal”, memperolok dan menyerang pasukan keamanan seperti yang dituduhkan, yang terdapat di dalam berkas-berkas. Ini mengejutkan mengingat banyaknya petugas intelijen yang memantau gerakan keramaian itu (salah satunya adalah Mayor Gerhan Lantara, yang sedang mengambil foto-foto pada saat ia ditusuk).[†] Hanya ada beberapa diagram kejadian yang digambar dengan tangan. Komisi mengobservasi bahwa rekaman suara dan gambar serta peralatan, disita, dan ada satu video yang tersebar luas memperlihatkan apa yang terjadi di Santa Cruz—yang dibuat oleh Max Stahl dan ditayangkan oleh Yorkshire Television di Inggris. Video ini tidak pernah dipertimbangkan.[‡] Demikian halnya dengan berkas-berkas perkara militer maupun polisi, yang tidak satu pun berisi pernyataan dari orang-orang asing yang ada pada saat itu.
- Polisi gagal mengidentifikasi secara memadai senjata yang dikatakan telah disita dari Permakaman Santa Cruz dan digunakan oleh para demonstran

^{*} Laporan Ndiaye, para.56. Pelapor Khusus melaporkan bahwa semua saksi mata orang Timor Leste yang ia temui mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan umum kepada keluarga untuk datang dan mengidentifikasi jasad para korban meninggal, seperti yang diklaim oleh Kepala Kepolisian Timor Timur.

[†] Ketiadaan bahan-bahan ini menempatkannya di luar pola yang lazim dari semua pengadilan politik yang pernah diteliti oleh CAVR. Sebagai contoh, Berkas Perkara Inacio de Jesus dos Santos berkaitan dengan sebuah unjuk rasa di Universitas Timor Timur pada 9 Januari 1995, berisi beberapa foto unjuk rasa dan penangkapan terhadap para tertuduh. (Inacio de Jesus dos Santos, Berkas Perkara: 36/PID.B/1995/PN.DIL)

[‡] Komisi mengamati bahwa kegagalan untuk menggunakan bukti yang berhubungan juga mewarnai persidangan-persidangan di Jakarta yang dijalankan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc tentang Timor Timur pada 2002 dan 2003 – mungkin yang paling mengagetkan adalah kegagalan untuk mempertimbangkan rekaman film yang memperlihatkan pemimpin milisi Eurico Guterres berpidato kepada kelompok-kelompok milisi, di hadapan pejabat-pejabat senior Indonesia, sebelum kelompok-kelompok itu melakukan huru-hara di seputar Dili dan menyerang rumah Manuel Carrascalão dan membunuh sekurang-kurangnya 12 orang. Komisi telah meneliti film ini dan mempunyai rekaman dalam arsipnya.

untuk melawan pasukan keamanan. Tidak ada bukti yang memperlihatkan siapa yang menemukan apa, di mana, dan kapan, oleh karena itu tidak ada bukti bahwa persenjataan tersebut benar-benar ditemukan di permukiman atau pada para demonstran. Hanya ada daftar benda di dalam berkas-berkas tersebut dengan penjelasan:

Sejumlah barang bukti ditemukan di TKP oleh para anggota Brimob, dan kemudian diserahkan kepada Polisi Wilayah Timor Timur, kemudian disita oleh para penyidik.

- Berbagai catatan khusus dibuat mengenai barang-barang yang disita dari Bank Summa dan bekas kantor Kepolisian Wilayah, serta sejumlah barang yang disita dari rumah tersangka demonstran Francisco Branco dan Jacinto Alves.⁷⁵⁶ Daftar barang yang diberikan oleh polisi sebagai bukti tersebut berbeda dengan beberapa daftar militer (lihat boks “Pertanyaan yang tidak terjawab”, di bawah setelah paragraf 661), terutama karena tidak menyebutkan senjataapi sama-sekali. Perbedaan mencolok ini sangat penting, karena polisiliah yang disebut oleh polisi militer sebagai pemilik senjata-senjata api tersebut.⁷⁵⁷

631. Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pembunuhan di Luar Hukum, Seketika, atau Sewenang-wenang menemukan bahwa berbagai penyelidikan oleh polisi sipil tidak layak karena:

- Sebagai bagian dari angkatan bersenjata, kepolisian tidak memiliki kemandirian dan ketidakberpihakan.
- Pemeriksaan forensik, khususnya otopsi dan uji balistik, tidak memenuhi syarat: “Kepala Kepolisian mengatakan kepada Pelapor Khusus bahwa peralatan teknologi yang dibutuhkan tidak tersedia di Timor-Leste.”
- Penyelidikan kejahatan tidak memenuhi syarat, gagal mengidentifikasi baik para pelaku maupun korban, bahkan jumlah korban atau kepastian mengenai jumlah dan keberadaan orang-orang hilang. Ia secara khusus mengatakan bahwa kepolisian hanya memusatkan perhatian pada menyelidiki para demonstran.⁷⁵⁸
- Dilakukan penanganan yang sembarangan terhadap jasad para korban, termasuk penguburan jasad-jasad tersebut sehari setelah pembantaian, tanpa otopsi, pemotretan, atau pengidentifikasian menyeluruh yang layak.⁷⁵⁹
- Hampir tidak ada upaya untuk mengidentifikasi jenazah dan sepengetahuan Pelapor belum ada permintaan secara terbuka yang diajukan kepada keluarga orang yang hilang untuk mengenali jenazah-jenazah yang berada di kamar mayat.⁷⁶⁰

Laporan oleh berbagai komando militer di Timor-Leste

632. Komando militer di Timor-Leste melaksanakan penyelidikannya sendiri mengenai peristiwa Santa Cruz. Dua laporan telah disiapkan oleh Panglima Komando Pelaksanaan Operasi Timor Timur (Kolakops Timor Timur), Brigadir Jenderal

Rudolf S. Warouw, dan dikirim ke Komando Daerah Militer yang bemarkas di Bali. Laporan tersebut, bertanggal 13 November 1991 dan 30 Desember 1991, merupakan versi resmi militer mengenai apa yang telah terjadi ketika demonstrasi berlangsung dan menjelaskan tanggapan dari pasukan keamanan.* Laporan-laporan tersebut di sini disebut sebagai Laporan Warouw Pertama dan Kedua secara berturut-turut.† Tidak tampak adanya upaya yang telah dilakukan oleh militer untuk menyelidiki berbagai pembunuhan di luar hukum yang terjadi pada 12 November 1991 atau berbagai pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya yang terjadi di sana.

633. Distrik Dili disebut sebagai “Sektor C” oleh Kolakops dan sektor tersebut berada di bawah komando infanteri Kolonel Binsar Aruan. Kolonel Binsar membentuk Kompi Gabungan pada malam 11 November untuk mengatur jalannya acara tabur bunga bagi Sebastião Gomes Rangel, yang oleh militer telah diketahui akan dilakukan esok harinya. Kompi Gabungan tersebut terdiri atas satu peleton Brigade Mobil Polisi dan dua peleton prajurit dari Batalion 303. Sejumlah tentara juga tampak datang dari Kodim Dili, serta Yonif 744.

Laporan Warouw Pertama

634. Laporan Warouw Pertama mengungkapkan bahwa penyelidikan oleh militer dilakukan segera setelah kejadian tetapi hanya para anggota pasukan keamanan yang diwawancara. Laporan tersebut terdiri atas sebuah dokumen berisi 22 halaman yang ditandatangani oleh Brigadir Jenderal Warouw, yang dibuat berdasarkan dokumen 12 halaman yang dibuat oleh Kolonel Binsar Aruan. Kolonel Binsar adalah komandan Sektor C, daerah militer yang meliputi Dili. Ia telah membentuk Kompi Gabungan, yang terdiri atas dua peleton dari Batalion 303 dan satu peleton Brimob, pada malam sebelum demonstrasi tersebut. Kompi Gabungan tersebut dipimpin oleh Letnan Dua Mursanib.

635. Seperti dua dokumen tertulis tersebut, Laporan Warouw Pertama juga berisi berbagai diagram yang memperlihatkan gerakan-gerakan pasukan sehubungan dengan adanya kunjungan dari Pelapor Khusus PBB mengenai Penyiksaan, Profesor Kooijmans, yang berlangsung pada saat yang sama, serta sehubungan dengan antisipasi terhadap demonstrasi dan setelahnya. Laporan tersebut berisi perincian mengenai persenjataan yang disita dari Perkuburan Santa Cruz dan berbagai laporan bahwa mereka yang terluka dibawa ke rumah sakit dan 308 orang dibawa

* Dokumen-dokumen ini disumbangkan kepada Komisi oleh Menteri Luar Negeri RDTL, Jose Ramos Horta, dan tersimpan dalam arsip CAVR. Dokumen itu antara lain dimintakan, tetapi tidak pernah diterima, oleh Pelapor Khusus Ndiaye.

† Laporan Khusus tentang Peristiwa “12 November 1991” di Dili, Timor Timur, No. Lapsus/26/XI/1991, bertanggal 13 November 1991, dari Panglima Komando Pelaksana Operasi Timor Timur (Pangkolakops). Laporan sepanjang 22 halaman dari Panglima Kolakops dikirim kepada Panglima Daerah Militer, bemarkas di Bali, dengan tembusan kepada 10 pejabat lainnya termasuk Panglima ABRI, Kepala Staf Angkatan Darat; Laporan Khusus Tentang Pengungkapan Para Perusuh Yang Terlibat Dalam Peristiwa Demonstrasi 12 November 1991 Di Santa Cruz, Dili, Timor Timur, bertanggal 30 Desember 1991. Laporan pertama ditandatangani dan disegel oleh Panglima Komando Pelaksana Operasi Timor Timur, namun Laporan kedua hanya mencantumkan nama Pangkolakops.

ke markas kepolisian. Dari jumlah tersebut, 49 orang dimasukkan tahanan dan 259 orang dikembalikan ke keluarga masing-masing.

636. Jelas bahwa penyelidikan ini tidak pernah tidak memihak. Pertama, penyelidikan ini dilakukan oleh orang yang memimpin angkatan bersenjata di Timor-Leste, dan oleh karena itu bertanggung jawab untuk tindakan-tindakan yang dilakukan militer di permukiman tersebut. Kedua, sejak awal militer berasumsi bahwa demonstrasi tersebut diatur oleh gerakan resistansi, memberikan alasan untuk tindakan militer yang dilakukan tersebut. Laporan Warouw Pertama mengatakan tujuannya adalah untuk:

Melaporkan kepada Komando atas tentang [*sic*] kasus unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok anti integrasi dengan didukung oleh GPK Fretilin... dengan maksud agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya.*

637. Analisis militer tentang peristiwa tersebut didasarkan pada anggapan bahwa unjuk rasa tersebut direncanakan oleh elemen-elemen radikal dan kriminal; unjuk rasa tersebut bukan sekadar peringatan massal secara damai. Laporan Warouw Pertama mengatakan bahwa “orang-orang yang kami hadapi bukanlah para demonstran melainkan para gerilyawan bersenjata”. Dua perbedaan antara unjuk rasa ini dan kegiatan berkumpul secara damai, sebagaimana dicatat oleh Laporan Warouw Pertama, hanyalah contoh pelaksanaan hak kebebasan mengeluarkan pendapat:

- Unjuk rasa ini merupakan pertama kalinya bendera-bendera Falintil dan Fretilin ditunjukkan di depan umum.
- Para pengunjuk rasa membawa poster-poster dan spanduk-spanduk para pemimpin GPK yang dianggap sebagai simbol kesatuan nasional Timor Timur.

638. Unjuk rasa tersebut dianggap sebagai bagian dari suatu rencana besar GPK (“Gerakan Pengacau Keamanan”, mengacu kepada Gerakan Resistansi), untuk memengaruhi sejumlah kecil orang, termasuk para pelajar/mahasiswa dan pemuda, untuk melakukan berbagai kegiatan antiintegrasi yang merusak. Dikatakan bahwa rencana besar ini termasuk strategi membesar-besarkan masalah dan menggunakan agama dan gereja untuk memengaruhi rakyat. Laporan ini mengakui bahwa pembatalan kunjungan delegasi Parlemen Portugis menyebabkan kekecewaan besar. Pihak militer menemukan bahwa pemimpin gerakan Resistansi mengambil kesempatan untuk merencanakan berbagai tindakan merusak untuk memancing tindakan represif pasukan keamanan. Dilaporkan bahwa pihak Resistansi menyebarkan kabar bohong mengenai ABRI. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa para anggota ABRI menganggap para pengunjuk rasa sebagai bagian dari gerakan Resistansi, dan dengan demikian sebagai musuh. Oleh karena itu, para pengunjuk rasa dianggap sudah selayaknya, jika tidak dianggap sebagai sasaran yang sah, dijadikan sasaran serangan.

* Panglima Kolakops, Brigadir Jenderal Rudolf Warouw, memerintahkan: “pengusutan kasus unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok Fretilin dan pendukungnya...”. Dalam Laporan Pertama bertanggal 13 November.

639. Demonstrasi ini juga dikatakan berbeda karena “para pengunjuk rasa secara sengaja menyerang personel ABRI, mencoba merampas persenjataan mereka, dan menghina kehormatan mereka. Unjuk rasa brutal seperti ini merupakan taktik pemberontakan yang khas.” Karakter para pengunjuk rasa yang dikatakan bersenjata dan agresif merupakan poin penting kedua dalam analisis militer mengenai kejadian tersebut. Menurut laporan itu, Mursanib memerintahkan anakbuahnya untuk menembakkan tembakan peringatan ke udara tetapi massa terus bergerak maju, ada teriakan-teriakan untuk menyerang, dan batu-batu dilemparkan. Setelah tembakan peringatan kedua sebuah granat dengan kunci masih terpasang dikatakan dilemparkan ke arah militer dan ditangkap oleh Letnan Dua Mursanib. Terjadi bentrokan ketika para pengunjuk rasa berusaha merebut senjata dari para tentara dan tangan seorang tentara terluka. Akhirnya, melihat situasi yang genting, senjata ditembakkan selama antara enam dan delapan detik kemudian massa yang berkumpul terinjak-injak dan banyak yang terluka karenanya.

640. Pendapat dalam Laporan ini, berdasarkan versi fakta-fakta ini, adalah bahwa para petugas keamanan bertindak untuk membela diri, tanpa berpikir panjang dalam suatu situasi tertekan di mana massa yang menyerang mengancam jiwa mereka dan meneriakan kata-kata hinaan yang menyakitkan. Laporan itu menegaskan bahwa tentara yang profesional diharuskan mengambil tindakan tegas, cepat, dan tepat dalam keadaan-keadaan genting pada saat nyawa dan senjata mereka terancam. Laporan ini juga menyatakan bahwa perkembangan yang terjadi disesalkan, tetapi masalah ini melibatkan berbagai upaya ABRI untuk membela kehormatan dan kedaulatan bangsa karena GPK/Fretilin merupakan musuh bangsa yang harus dimusnahkan.*

641. Sejumlah rekomendasi diajukan untuk:

- Mengadili para pemimpin dan mereka yang terlibat dalam kekacauan tersebut dengan dakwaan subversi.
- Menghadapkan para anggota pasukan keamanan yang terbukti bersalah ke pengadilan, sementara mereka yang terlibat namun tanpa cukup bukti yang memberatkan akan dijatuhi sanksi.
- Menolak masuknya para wartawan yang berpura-pura sebagai wisatawan karena alasan-alasan operasional.

Kegagalan dalam metode penyelidikan militer

642. Komisi telah mengidentifikasi berbagai kekosongan dan kegagalan dalam cara investigasi yang dilakukan oleh militer. Pertama, terdapat beberapa isu penting mengenai konflik kepentingan. Militer bergantung pada versi informasi yang diberikan oleh perwira-perwira yang bertanggung jawab dalam Kompi Gabungan

* Pelapor Khusus PBB, meskipun tidak mempunyai akses kepada dokumen-dokumen yang diperiksa oleh Komisi, dapat menyimpulkan bahwa: “[T]indakan pasukan keamanan bukanlah suatu reaksi spontan terhadap massa yang mengamuk, melainkan operasi militer terencana yang dirancang untuk menangani sebuah ekspresi terbuka dari perbedaan politik dengan cara yang tidak sesuai dengan standar-standar hak-hak asasi manusia internasional.” [Laporan Ndiaye]

mengenai kejadian di permakaman. Terlebih lagi, militer menggunakan pasukan keamanan yang terlibat dalam pembantaian tersebut untuk menyelidiki tempat kejadian perkara. Selama operasi “pembersihan”, para prajurit yang berasal dari Yonif 303 dan Brimob bersama-sama mengumpulkan bukti yang memberatkan para pengunjuk rasa. Mereka juga memindahkan mayat-mayat dan para korban yang selamat sebelum penyelidikan forensik di tempat kejadian dilakukan.

643. Terdapat banyak kesempatan untuk menambah atau menghancurkan bukti dalam situasi seperti itu. Tidak terdapat rantai perlindungan yang semestinya terhadap penyimpanan barang bukti. Terdapat satu diagram umum dalam berkas yang menunjukkan di mana senjata-senjata tertentu ditemukan tetapi hanya satu senjata (granat yang disebutkan Mursanib) yang tercatat telah ditemukan oleh seseorang. Senjata yang lainnya hanya ditandai sebagai yang ditemukan oleh unit militer, contohnya, Yon 303 atau Brimob. Juga sangat tinggi risiko dihancurkannya barang bukti. Para pengunjuk rasa melaporkan bahwa sebelum pasukan keamanan mengeluarkan mereka dari permakaman, mereka melihat darah dibersihkan dari jalanan.⁷⁶¹ Pada kenyataannya, penghancuran ini masih berlanjut selama beberapa hari setelahnya, dengan membuang diam-diam jasad para korban yang mati, tanpa penanganan forensik yang layak dan tanpa pemulangan ke keluarga korban.

644. Tidak terdapat catatan mengenai tempat ditemukannya setiap jasad atau korban luka, maupun mengenal kondisi tubuh atau orang tersebut. Lokasi tertembaknya para korban sangat penting secara khusus, mengingat klaim bela diri yang dikemukakan oleh pihak militer. Jika pihak militer benar-benar menembak untuk membela diri, para korban akan berada sangat dekat dengan pasukan keamanan dan seharusnya tidak ada korban dengan luka-luka tembak berada di dalam permakaman atau jauh dari “garis konfrontasi” antara pasukan keamanan dan para pengunjuk rasa.

Laporan Warouw Kedua

645. Laporan kedua dari Kolakops Timor Timur, tertanggal lebih daripada enam minggu setelah laporan pertama, memusatkan perhatian pada menyampaikan informasi intelijen yang diperoleh dari orang-orang yang didakwa dan diinterogasi terkait Resistansi di Timor-Leste. Laporan itu berisi:

- Berbagai catatan menunjukkan siapa yang ditangkap dan dibebaskan atau masih ditahan, dan dakwaan yang telah dijatuhkan terhadap tahanan tertentu.
- Sejumlah diagram struktur jaringan resistansi, digambar dengan tangan.
- Berbagai laporan intelijen mengenai kegiatan orang-orang asing yang hadir ketika unjuk rasa terjadi.

646. Laporan tersebut bukan merupakan penyelidikan untuk mencaritahu siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya pembantaian dan berbagai pelanggaran berat lain terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanan di Santa Cruz. Alih-alih, melihat penjelasan yang terperinci mengenai struktur dan

strategi jaringan klandestin dan rangkuman kesaksian yang didapat dari para pengunjung rasa yang ditahan, tampak bahwa kemenangan intelijen ini merupakan justifikasi untuk pembunuhan di permukiman Santa Cruz.

Penyelidikan oleh Polisi Militer

647. Penyelidikan terhadap tindakan yang dilakukan oleh militer di Timor-Leste tentang pembunuhan Santa Cruz dilakukan oleh polisi militer yang bertugas di luar Komando Daerah Militer (Kodam) di Bali. Komisi mendapatkan tiga laporan yang dibuat oleh polisi militer yang ditugaskan untuk memberikan laporan hasil investigasi berbagai tindakan yang dilakukan oleh Kompi Gabungan.⁷ Berbagai laporan tersebut, yang berturut-turut disebut di sini sebagai Laporan Polisi Militer Pertama, Kedua dan Ketiga, bertanggal 26 November 1991, Desember 1991, dan Januari 1992.⁷⁶²

Laporan Polisi Militer Pertama

648. Ketiga laporan tersebut menerima fakta-fakta demonstrasi versi Kolakops, khususnya latar belakang politis dan karakter berbahaya dari para pengunjung rasa. Laporan Polisi Militer Pertama sebagai contoh mengatakan:

Massa demontran [*sic*] yang melakukan unjuk pada tanggal 12 November 1991 tersebut dalam kondisi sangat rasa brutal, emosional dan beringas akibat pengaruh hasutan dari kelompok anti Integrasi yang diduga mendalangi Demontran [*sic*] tersebut.

649. Laporan itu membenarkan bahwa para anggota dari Kompi Gabungan melakukan semua yang mungkin untuk menguasai kerumunan dengan menggunakan cara-cara persuasif, dengan mengarahkan dan melepaskan tembakan peringatan sesuai dengan prosedur. Laporan itu mengatakan bahwa pasukan keamanan tidak mengantisipasi bahwa massa akan menjadi semakin beringas dan menyerang mereka dengan senjata tajam, senjata api, dan granat. Pasukan terpaksa menembak untuk membela diri. Laporan menegaskan bahwa Pasal 49 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan bela diri terhadap ancaman langsung terhadap badan, kehormatan, atau hak milik pribadi tidak dapat dihukum. Pembelaan diri yang melampaui batas ini masih dapat dibolehkan jika “langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tersebut.” Maka, laporan tersebut menyimpulkan, pasukan keamanan bertindak sesuai hukum.

.....
* Komisi telah memeriksa asal laporan pembantaian yang disampaikan kepada Polisi Militer dan terdapat dalam Berkas Perkara Sersan Aloysius Rani (Berkas Penyelidikan Kasus berhubungan dengan Kasus Tertuduh: Sersan Satu Aloysius Rani, Denpasar, No. DPP-10/A-09/Komando Daerah Polisi Militer IX/1992, April 1992). Laporan ini adalah laporan polisi No.LP-28/A-22/Detasemen Polisi Militer IX/4/1991, yang disampaikan oleh Sersan Dua Zainuddin, melaporkan tentang: “...bentrokan antara pasukan keamanan dan pengunjung rasa bertentangan dengan integrasi dengan Indonesia. Sebab dari bentrokan tersebut di atas adalah karena sekelompok pemuda anti integrasi dengan Indonesia melakukan unjuk rasa dengan kekerasan dan brutal yang mengakibatkan pasukan keamanan melepaskan tembakan”.

650. Lebih jauh lagi, laporan itu menyatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa terhadap Mayor Gerhan Lantara dan Prajurit Domingos merupakan tindak kriminal yang harus diproses secara hukum.

Laporan Polisi Militer Kedua

651. Laporan Polisi Militer Kedua, sepanjang tujuh halaman, menentanghkan penjelasan baru atas berbagai pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia yang terjadi di Santa Cruz. Laporan itu menyebutkan para anggota Kompi Gabungan dan anggota ABRI lainnya yang bertindak di luar komando. Tiga anggota Kodim Dili dilaporkan keluar dari Kodim tanpa diperintahkan, kemudian pergi ke permukiman dan menembaki massa. Ketiga tentara itu adalah Sersan Mayor Petrus Saul Meda, Sersan Satu Aloysius Rani, dan Sersan Satu Udin Syukur. Seorang anggota kepolisian, Kopral Satu Marthin Alau, juga pergi ke tempat kejadian tanpa perintah dan menusuk seorang pengunjuk rasa karena emosinya meninggi pada saat melihat perilaku massa dan perobekan terhadap bendera Indonesia di depan Kantor Polisi Dili. Laporan itu menyimpulkan bahwa para personel ini bertindak atas kehendak mereka sendiri, dan dengan melakukan hal tersebut berarti mereka telah melanggar pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

652. Komisi mengamati bahwa tidak jelas mengapa elemen cerita ini hanya muncul di dalam Laporan Polisi Militer Kedua pada Desember 1991. Keempat “pelaku dengan kehendak sendiri” mengatakan mereka segera melapor begitu kembali ke markas masing-masing pada 12 November dan menyerahkan senjata yang mereka gunakan dan menunggu tindakan pendisiplinan. Peran mereka seharusnya sudah diketahui pada saat Laporan Warouw dan Laporan Polisi Militer Pertama disiapkan.⁷⁶³

653. Yang sangat mengkhawatirkan dalam Laporan Polisi Militer Kedua adalah perubahan dari pernyataan asli yang diberikan oleh saksi Letnan Dua Mursanib, yang akhirnya dipecat dari jabatannya. Komisi telah memeriksa salinan asli berita acara pemeriksaan Mursanib yang pertama yang ditandatangani. Komisi telah membandingkan salinan itu dengan fotokopi dari pernyataan asli yang tercantum di dalam Laporan Polisi Militer Kedua. Dalam salinan dokumen tersebut, kata-kata dari dua hal yang terkait dengan temuan granat telah ditutupi/dihapus dan kemudian ditik ulang. Beberapa perubahan ini tidak diparaf oleh deponen atau para penyidik.

Laporan Polisi Militer Ketiga

654. Laporan Polisi Militer Ketiga, hanya sepanjang lima halaman, mengemukakan dua hal penting baru—peran Yonif 303 dari Taibessi dan enam prajurit lain yang bertindak atas kehendak mereka sendiri. Laporan itu berisi rangkuman pernyataan dari 36 saksi dan daftar 12 orang yang berpotensi sebagai tersangka. Laporan itu menggarisbawahi peran dari:

- Dua anggota Milsas, Prajurit Dua Mateus Maia dan Prajurit Dua Alfonso yang menembak mati seorang wartawan asing (Kamal Bamadhaj) di depan kantor Departemen Penerangan, Dili.

- Tiga anggota Milsas yang berada di bawah Yonif 303/SSM yang menembaki massa setelah melewati Brimob di Jembatan Ponte My Friend (di Taibessi, dekat Perkuburan).
- Tiga anggota Yonif 744/SYB bernama Sersan Mayor Adolfo Tilman, Koprak Satu Mustari, dan Prajurit Satu Gomboh. Mereka diduga memukuli dan menusukkan senapan mereka pada beberapa orang pengunjuk rasa.
- Letnan Dua Alex Penpada, komandan peleton intelijen Korem 164/Wira Dharma. Ia diduga memukuli para pengunjuk rasa dan melihat seorang anggota [milisi] Railakan memukuli para pengunjuk rasa.

655. Analisis baru dibuat dan mengungkap peranan Batalion 303/SSM yang datang dari Taibessi setelah mendengar tentang situasi yang berkembang di permukiman:

Ada gerakan unsur Yonif 303/SSM yang telah melintasi SST Brimob di depannya baik dari arah Taibessi maupun Denpom IX/4, diduga disebabkan SST Brimob kelihatan ragu-ragu dalam menghadapi saat kritis di atas.⁷⁶⁴

656. Laporan itu menekankan bahwa karena alasan itu, Batalion 303/SSM yang tiba di lokasi kejadian mendahului Brimob, membentuk satu SSK (Satuan Setingkat Kompi) yang kemudian lebih dahulu berhadapan dengan para pengunjuk rasa:

[P]ada tembakan kedua, sebagian Petugas telah mengarah langsung kesasaran [*sic*] di mana sebagian dilakukan oleh Prajurit eks Ta Milsas yang di-BKO [Bawah Kendali Operasi]-kan pada Yonif 303/SSM, yang berakibat fatal dengan jatuhnya korban difihak [*sic*] demonstran. ...Disamping [*sic*] tindakan Petugas PHH [Pasukan Huru Hara] di atas yang dirasakan kurang tepat, terdapat beberapa Prajurit dengan tanpa Perintah telah memperkeruh suasana ikut tembak demonstran...Pada saat konsolidasi dilakukan, di mana para tawanan dikumpulkan, masih sempat beberapa Petugas baik yang berpakaian lengkap maupun tidak lengkap serta yang berpakaian preman ada yang masih menganiaya demonstran.⁷⁶⁵

657. Menurut laporan tersebut, perubahan status dan tugas Yonif 303/SSM memainkan peran penting dalam menjawab mengapa para personel bertindak seperti itu. Yonif 303 “pada awalnya bertugas di Timor Timur adalah sebagai satuan pemukul dengan tugas mencari, menemukan, dan membunuh musuh”. Dikatakan bahwa unit ini tidak dilatih untuk tugas-tugas Teritorial seperti mengontrol kekacauan dan karena patriotismenya yang tinggi, provokasi yang mereka hadapi membuat mereka bertindak memecahkan masalah itu dengan cara yang paling mereka kenal.⁷⁶⁶

Metode penyelidikan polisi militer

658. Polisi mendasarkan berbagai temuannya terutama pada sejumlah berita acara pemeriksaan. Laporan Pertama berisi 38 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disertai tandatangan asli dari yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan terhadap 30 anggota Kompi Gabungan, delapan anggota Brimob, dan 28 tentara Yonif 303, empat anggota Yonif 744, dan empat warga sipil. Para warga sipil ini, Viktor Beno vedes [sic] (15 tahun), Joaniko [sic] dos Santos, Yose [sic] Francisco da Costa, dan Manuel Eduardo Dosantos [sic], merupakan warga sipil pertama yang diwawancarai dalam investigasi yang dilakukan oleh militer maupun polisi. Pernyataan mereka dibuat dan ditandatangani di markas Detasemen Polisi Militer IX/4 tetapi tidak jelas apakah mereka sedang ditahan pada waktu itu. Berita Acara Pemeriksaan mereka membenarkan bahwa para pengunjuk rasa beringas dan agresif serta membawa senjata seperti tongkat, pisau, dan batu.

659. Laporan Polisi Militer Kedua berisi lima Berita Acara Pemeriksaan tambahan-BAP dari Kepala Staf Kodim, Pieter Lobo, dan para anggota ABRI yang diduga telah bertindak di luar komando.

660. Komisi melihat bahwa berbagai pernyataan dari anggota keamanan sangat mirip, sering kata demi kata, dalam menjelaskan ancaman yang benar-benar terjadi terhadap pasukan keamanan dan bagaimana mereka bertindak membela diri. Semua anggota keamanan yang diperiksa sama-sama melaporkan mengenai massa yang agresif, “beringas”, dan “brutal”; mereka semua mendengar hinaan yang sama dan melihat atau mendengar hal-hal yang sama. Kemiripan seperti itu dapat berarti bahwa semua itu benar; tetapi dapat juga mencerminkan pemutarbalikan jalannya keadilan dengan kesepakatan bersama mengenai versi kejadian atau versi yang dibuat oleh para penyidik. Melihat bagaimana para saksi independen, seperti yang dilaporkan oleh berbagai organisasi internasional, melaporkan dengan keseragaman sebaliknya bahwa para pengunjuk rasa tidak bersenjata, tidak beringas, dan tidak melakukan provokasi terhadap pasukan keamanan yang tidak memberikan peringatan sebelum mulai menembak, para pencari fakta yang bersungguh-sungguh seharusnya mempertimbangkan kedua versi tersebut untuk membuat penilaian terhadap fakta-fakta secara objektif dan adil. Kenyataan bahwa keberadaan dan konsistensi dari laporan-laporan lain tidak pernah dipertimbangkan sepanjang penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Indonesia merupakan alasan kekhawatiran yang nyata akan integritas proses penyelidikan tersebut.

661. Pihak Polisi Militer tampaknya melaksanakan penyelidikan forensik di permakaman pada 14 November 1991 namun penyelidikan ini sangat tidak menyeluruh.⁷⁶⁷ Jangkauan penyelidikan hanya sejauh jumlah bekas peluru yang ditulus dalam sebuah diagram sederhana dari tempat kejadian perkara. Ada tujuh puluh dua bekas peluru yang terhitung. Semuanya kecuali satu tanda bekas peluru didapat di luar permakaman dan di dinding, pohon, dan tiang listrik depan permakaman. Namun, arah peluru tidak dicatat dan dibandingkan dengan posisi pasukan, dan peluru yang tertinggal tidak diambil untuk uji balistik. Tampaknya tidak ada pemeriksaan terhadap lokasi untuk pembuktian adanya bentuk perlakuan buruk lain yang mungkin terjadi, seperti bekas senjata tajam atau popor senapan yang tampak pada batu nisan. Tidak ada kesimpulan yang didapat dari penyelidikan tempat kejadian perkara.

Pertanyaan yang tidak terjawab

Berbagai pengabaian dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pihak keamanan Indonesia memberikan pemahaman yang berharga terhadap kredibilitas proses-proses penyelidikan.

Komisi melihat bahwa sejumlah pertanyaan yang seharusnya merupakan pertanyaan mendasar bagi setiap penyelidikan yang sungguh-sungguh dan tidak memihak terhadap penggunaan kekuatan mematikan oleh para petugas penegak hukum tampaknya tidak ditanyakan, dan jika ditanyakan, tidak dipertimbangkan secara memadai. Mengenai hal ini terutama dapat dilihat dalam berbagai versi yang berlawanan tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Contohnya, tidak pernah ditanyakan:

Jenis pasukan seperti apa yang ditugaskan untuk menangani para pengunjuk rasa dan perlengkapan apa yang diberikan kepada mereka? Apakah pasukan dan perlengkapan tersebut sesuai dengan situasi yang ditangani? Apakah peralatan huru-hara standar seperti peluru karet, meriam air, dan gas airmata digunakan?

Apakah tepatnya ancaman yang dihadapi oleh pasukan keamanan? Bukti apa saja yang menunjukkan bahwa tentara tersebut bertindak dengan alasan membela diri?

Jika penggunaan kekerasan dan persenjataan tidak bisa dihindari, seperti yang dikatakan oleh militer dan KPN, apakah pasukan keamanan melakukan pengekangan dan tindakan secara proporsional terkait dengan ancaman terhadap mereka dan tujuan sah yang akan dicapai? Apakah ancaman tersebut sedemikian besar melihat banyaknya tembakan yang dilancarkan?*

Jika penggunaan kekerasan tidak dapat dihindari dan digunakan untuk membela diri, mengapa, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh pelapor khusus PBB:

[P]ara pengunjuk rasa yang mencoba melarikan diri dari tempat pembunuhan itu ditembak dari belakang; Mengapa, setelah penembakan telah reda, para tentara terus menyusuk, menendang, dan memukuli pengunjuk rasa yang masih hidup (termasuk yang terluka) di dalam permakaman itu, dalam perjalanan mereka ke

* Gambaran keseluruhan yang muncul dari berkas-Berkas tersebut adalah bahwa sekitar 140 tembakan dilepaskan. Pemeriksaan senjata setelah kejadian mengungkapkan bahwa para anggota Kompi Gabungan dari Yonif 303 menembak 73 kali dan para anggota Brimob menembak 33 kali. Sembilan tembakan peringatan dilepaskan oleh Yonif 744. Setidaknya 25 tembakan dilepaskan oleh Batalion 303 yang datang dari Taibessi. Oleh karena itu, 140 tembakan telah dilepaskan. Sebagai tambahan, 72 bekas tanda peluru ditemukan di tempat kejadian oleh polisi militer.

rumah sakit, dan kemungkinan di rumah sakit itu sendiri; atau mengapa tembakan sporadis terdengar di seluruh kota dan di desa-desa terdekat sepanjang hari itu, dan mungkin berlanjut selama beberapa hari?⁷⁶⁸

Mengapa menggunakan para tentara tempur (Batalion 303) dan bukan hanya Brimob yang dilatih untuk mengatasi situasi-situasi kekacauan?

Apakah ada orang yang memegang kendali penuh atas situasi di permakaman? Siapa yang seharusnya memegang kendali penuh? Apakah terdapat koordinasi antarpasukan berbeda yang ada di sana?

Bagaimana nasib mereka yang meninggal dan hilang?

Kegagalan untuk menanyai aktor-aktor terkait

Meskipun berbagai pernyataan yang diperoleh para penyidik militer dari personel pasukan militer berpangkat rendah tampak sangat menyeluruh, beberapa perwira senior yang terlibat dalam insiden tersebut tidak diwawancarai oleh polisi militer. Komandan Sektor C, Kolonel Binsar Aruan, dan Komandan Batalion 303, Asril H. Tanjung, tampaknya tidak ditanyai sebagai bagian dari investigasi pencarian kebenaran, yang dapat diteliti oleh Komisi.^{*} Demikian pula dengan aktor-aktor terkait seperti para komandan Kodim dan komandan Batalion 744, dan mereka yang terlibat dalam intelijen. Pertanyaan kunci tentang siapa yang bertanggung jawab; apa yang sebenarnya diperintahkan pada 12 November, dan apa yang telah dilakukan untuk mencegah kekerasan, dengan demikian, tidak pernah jelas. Lebih lagi, Kolonel Binsar Aruan merupakan orang yang bertanggung jawab menulis versi militer pertama tentang kejadian tersebut, yang secara umum dijadikan acuan oleh semua penyidik selanjutnya, walaupun kemudian ia dibebastugaskan.

Kesaksian dari orang asing yang berada bersama para pengunjung rasa tidak diambil. Mereka merupakan saksi mata atas peristiwa yang terjadi dan beberapa di antaranya, seperti Allan Nairn dan Amy Goodman, berada di depan unjuk rasa dan meskipun tidak tertembak, mereka diserang secara fisik oleh pasukan keamanan. Tidak ada alasan jelas dari berkas yang ada mengapa mereka tidak diwawancarai secara resmi atau mengapa pernyataan-pernyataan publik mereka tidak pernah dipertimbangkan oleh para penyidik.

.....
^{*} Komisi harus berasumsi bahwa telah dilakukan semacam penyelidikan akan peranan mereka karena para komandan ini kemudian didisiplinkan. Namun demikian, dapat dicatat bahwa untuk beberapa alasan bukti mereka tidak digunakan dalam upaya memperoleh gambaran akurat akan apa yang terjadi pada demonstrasi itu.

Ketidakselarasan bukti yang ada

Para penyidik gagal memecahkan berbagai ketidakselarasan dalam bukti-bukti yang ada. Ketidakselarasan yang utama antara lain:

Setiap laporan dari Kolakops, polisi militer, dan berbagai pernyataan dan Berita Acara Pemeriksaan mencatat jumlah dan jenis senjata yang ditemukan di tempat kejadian. Hal ini penting untuk mengetahui apakah para pengunjuk rasa memang benar-benar bersenjata dan apakah pasukan keamanan punya alasan menembak untuk membela diri. Polisi sipil tidak menemukan senjata api, hanya senjata berupa 26 golok tradisional setempat, 70 pisau, satu tombak, dan 19 arit. Seorang anggota Brimob yang memberi kesaksian pada persidangan Jacinto Alves juga hanya menyebut tentang pisau, tombak, golok, batang pipa, dan bendera.⁷⁶⁹ Para saksi dan laporan-laporan lain menyebutkan beragam senjata api yang dilaporkan telah ditemukan di sekitar tempat kejadian, namun laporan-laporan ini juga sangat tidak konsisten. Komandan Kompi Gabungan, Letnan Dua Mursanib, menyebutkan satu senapan G3 dan dua pucuk pistol FN.⁷⁷⁰ Hal ini diperkuat dalam laporan polisi militer pertama pada akhir November. Namun demikian, dalam Laporan Warouw Pertama, yang dipersiapkan sehari setelah demonstrasi, melaporkan bahwa selain ditemukan senjata-senjata api itu, juga ditemukan satu senapan Mauser, satu senjata Smith and Weston dengan sejumlah peluru. Laporan Warouw Kedua menambahkan sebuah Mauser dan senapan Colt beserta semua nomor seri dari seluruh senjata. Tidak tampak ada upaya para penyidik untuk menetapkan alasan dari berbagai ketidakselarasan ini.

Juga terdapat ketidaksesuaian dalam bukti yang diberikan oleh perorangan. Letnan Dua Mursanib memberikan tiga pernyataan tertulis kepada para penyidik polisi militer.^{*} Pernyataan-pernyataan ini mengandung pertentangan yang sangat serius yang tidak bisa dipecahkan.[†] Sebagai contoh, dalam dua Berita Acara Pemeriksaan yang pertama, Mursanib mengatakan bahwa ia memerintahkan anggota Kompi Gabungan untuk melakukan tembakan peringatan ke udara. Tetapi, dalam pernyataan

* 17 November 1991 (BAP Pertama Mursanib), dalam Laporan Polisi Militer yang Pertama; 25 Desember 1991 (BAP Kedua Mursanib), dalam berkas Rani; 21 Maret 1992 (BAP Ketiga Mursanib), dalam berkas Rani. Komisi telah mengamati bahwa dua BAP Mursanib yang terakhir merupakan bagian dari berkas-berkas Aloysius Rani, BAP Pertama Mursanib tidak pernah diserahkan kepada Pengadilan Militer.

† Bahan berupa dokumen yang telah diperiksa oleh Komisi mengatakan bahwa perubahan dalam kesaksian yang diberikan Mursanib mungkin tidak pernah dipertanyakan oleh para penyidik karena keseluruhan proses memang direkayasa. Hal ini didukung oleh sifat mengarahkan dari berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan cecaran pertanyaan dalam isu tambahan pada saat masalah tersebut tampak telah dirancang dengan baik dalam wawancara-wawancara sebelumnya, demikian pula kegagalan mengakui pernyataan Mursanib yang asli sebagai bukti dalam kasus Rani.

ketiganya ia menyangkal telah memerintahkan tembakan peringatan. Menjawab pertanyaan pengarah: “Benarkah Anda telah memerintahkan untuk memberikan tembakan peringatan dan bagaimana bunyi perintahnya?” Mursanib menjawab:

“Saya tidak memerintahkan untuk melakukan tembakan peringatan pada waktu itu karena massa membuat kekacauan. Saya mendengar teriakan dari selatan sebuah kedai makanan dan suara senjata kokang, kemudian para anggota 303 yang merupakan bagian dari Kompi Gabungan mulai menembak. Saya melihat para anggota 303 menembak dan berteriak kepada mereka untuk menghentikan tembakan.”⁷⁷¹

Peran Mursanib dipaparkan secara berubah-ubah. Dalam Berita Acara pertama bertanggal 17 November 1991, Mursanib secara jelas disebut sebagai Komandan Kompi Gabungan dan hal ini juga disebutkan dalam Berita Acara kedua 25 Desember 1991. Namun, dalam Berita Acara ketiga pada Maret, ia menggambarkan dirinya sebagai pejabat sosial-politik, bahwa ia tidak pernah memberikan perintah apa pun, juga bahwa tidak pernah ada Kompi Gabungan, dan bahwa istilah tersebut mungkin hanya digunakan demi kemudahan.⁷⁷²

Fakta bahwa berbagai ketidaksesuaian ini tidak diacuhkan oleh para penyidik, padahal hal-hal itu sangat penting untuk mengetahui apakah pasukan keamanan bertindak sesuai prosedur dan bagaimana mereka diperintahkan, sekaligus telah mengungkapkan ketidakmampuan yang mengejutkan atau suatu kesengajaan untuk menutupi kebenaran.

Celah-celah dalam penyelidikan forensik

Dan juga, para penyidik tidak mengacuhkan adanya celah-celah penting dalam penyelidikan forensik. Proyektil dalam tubuh mereka yang luka dan mati merupakan bukti penting yang seharusnya disimpan dan dikirim untuk uji balistik untuk menyamakan dengan senjata yang dipakai menembak oleh pasukan keamanan. Berkas-berkas tersebut tidak berisi keterangan apa pun mengenai proyektil yang dikeluarkan dari luka dan tidak ada upaya untuk menyamakan proyektil tersebut dengan senjata yang dipakai pasukan keamanan.

Lebih jauh lagi, posisinya tetap membingungkan mengenai apa yang telah dilakukan oleh para penyidik forensik terhadap jasad para korban—sementara masyarakat mengklaim bahwa tidak terdapat fasilitas otopsi di Timor-Leste, Laporan Polisi Militer Pertama menyebutkan bahwa otopsi telah dilaksanakan terhadap sesosok mayat pada hari terjadinya pembantaian tersebut dan bahwa sebab

kematiannya adalah peluru yang tidak ditembakkan dari senjata yang dibuat untuk militer; juga terdapat 110 nama di dalam daftar laporan Rani yang disebut sebagai 'laporan otopsi'. Pelapor Khusus PBB diberitahu oleh Kepala Kepolisian bahwa kedelapan belas mayat tak dikenal dan Kamal Bamadhaj telah dikubur pada 13 November 1991 karena kamar mayat rumah sakit hanya dapat menampung tiga hingga empat jasad. Kepala Kepolisian juga mengatakan kepada Pelapor Khusus bahwa surat keterangan medis mengenai ke-19 mayat tersebut telah dibuat oleh rumah sakit.⁷⁷³

Diketahui bahwa jasad ke-19 orang tersebut segera dimakamkan di permakaman Hera dan tidak dikembalikan kepada keluarga mereka.* Kemudian, angka ini bukanlah total jumlah korban, dan laporan mengenai penguburan massal terhadap orang-orang yang terbunuh pada saat atau setelah tragedi Santa Cruz tidak ditindaklanjuti. KPN membongkar sebuah makam di Hera dengan traktor. Pelapor Khusus PBB tidak menyukai upaya ini:

"Pelapor Khusus ini tidak dapat menahan keterkejutannya terhadap cara pembongkaran sembrono yang digunakan, bertentangan dengan metodologi dasar dari pembongkaran oleh para ahli manapun dan dapat merusak hasil dari analisis forensik yang akan didapat. Kesimpulan yang didapat dari pembongkaran ini tidak relevan. Para korban dikubur di dalam peti, berpakaian lengkap, dan hanya satu jasad di dalam kuburan. Tidak dilakukan otopsi atas jasad tersebut, maka informasi yang penting, seperti identitas jasad dan sebab kematian, tidak diberikan".⁷⁷⁴

Penyelidikan dan laporan Komisi Penyelidik Nasional (KPN)

662. Pada 18 November 1991, dengan Dekrit Presiden No.53, Presiden Soeharto membentuk Komisi Penyelidik Nasional (KPN).⁷⁷⁵ Peninjauan ulang oleh Komisi atas penyelidikan yang dilakukan oleh KPN terbatas karena Komisi hanya memiliki akses kepada kesimpulan satu halaman dari sembilan halaman laporan awal KPN

.....
* Standar-standar internasional, yang tecermin dalam Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pembunuhan di Luar Hukum, Sewenang-wenang, dan Seketika, untuk penyelidikan semacam itu mensyaratkan bahwa jasad para korban tidak boleh dibuang sampai dilakukan suatu otopsi yang layak oleh ahli yang sesuai dan kompeten. Mereka yang melaksanakan otopsi harus mempunyai hak akses atas semua data penyelidikan, ke tempat ditemukannya mayat, dan ke tempat kematian diperkirakan terjadi. Jika jasad telah dikubur dan kemudian tampaknya penyelidikan diperlukan, jasad tersebut harus segera dan secara kompeten digali untuk diotopsi. Prinsip no. 13 menyatakan: "Jasad mayat tersebut harus diberikan kepada mereka yang melakukan otopsi untuk waktu yang cukup memungkinkan untuk dilakukannya sebuah penyelidikan secara menyeluruh. Sekurang-kurangnya, otopsi tersebut harus berusaha menemukan identitas mayat dan sebab serta cara kematian. Waktu dan tempat kematian juga harus ditentukan sampai tahap yang memungkinkan. Foto-foto berwarna yang jelas dari jasad tersebut harus dimasukkan dalam laporan otopsi untuk mendokumentasi dan mendukung temuan penyelidikan. Laporan otopsi tersebut harus memaparkan jika ada luka atau semua luka pada jasad termasuk bukti adanya penyiksaan."

bertanggal 26 November 1991. Kesimpulan ini dipublikasikan oleh Amnesty International dan dipublikasikan ulang sebagai bab tambahan dalam Laporan Ndiaye. Laporan lengkap KPN belum pernah dipublikasikan. Namun demikian, jelas dari kesimpulan laporan awal dan kritik dari organisasi hak-hak asasi manusia lain bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh KPN tidak menyeluruh dan tidak adil. Tentunya tanpa ragu KPN sepakat dengan versi militer mengenai kejadian tersebut, meskipun banyak bukti yang bertentangan.

663. Salah satu yang paling mengkhawatirkan mengenai KPN adalah kurangnya independensi dalam pembentukannya. KPN terdiri atas tujuh orang yang mewakili bagian-bagian organisasi pemerintah dan militer yang berbeda: diketuai oleh seorang jaksa dari Kejaksaan Agung yang berlatarbelakang militer, dan para anggotanya berasal dari Markas Besar ABRI, Dewan Pertimbangan Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat, juga Departemen Kehakiman, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Dalam Negeri.⁷⁷⁶ Amnesty International menunjukkan bahwa komposisi ini merupakan kelemahan KPN yang paling tidak bisa diterima dan karena itu rakyat Timor Leste tidak menganggap komisi ini sebagai badan yang tidak memihak melainkan sebagai perwakilan dari pemerintah dan militer Indonesia.⁷⁷⁶ KPN mengakui bahwa komisi ini menghadapi berbagai kesulitan untuk meyakinkan para saksi untuk berurusan dengan mereka:

[K]arena ragu dan khawatir kalau mereka akan langsung dikaitkan dengan insiden 12 November 1991 di Dili, atau karena takut mereka akan dianggap sebagai bagian dari kelompok antiintegrasi.⁷⁷⁷

664. Cara KPN melakukan investigasinya dijelaskan dalam laporan Pelapor Khusus PBB. Kerja yang dimulai pada 21 November 1991, setelah menghabiskan waktu satu minggu penelitian di Jakarta, adalah:

[D]ilanjutkan dengan sebuah penyelidikan di Timor Timur sejak tanggal 28 November hingga 14 Desember 1991. Komisi Penyelidik Nasional bertemu dengan berbagai perwakilan dari pemerintah lokal, para anggota Gereja, para anggota angkatan bersenjata, perorangan, dan saksimata; mengunjungi rumah-rumah sakit dan pusat-pusat penahanan polisi; mengunjungi pemakaman Santa Cruz; membongkar sebuah makam di Permakaman Hera; dan melakukan kunjungan-kunjungan dan penggalian-penggalian yang gagal di lokasi-lokasi di Pasir Putih, Tasi Tolu [sic], dan Tibar menanggapi adanya informasi dari penduduk setempat yang menduga bahwa tempat-tempat tersebut adalah kuburan massal para korban.⁷⁷⁸

* Komisi ini terdiri atas: Djaelani, S.H., Hakim Agung; Drs. Ben Mang Reng Say, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung; Clementino dos Reis Amaral, anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Harisugiman, Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri; Hadi Wayarabi, Direktur Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri; Anton Suyata, SH., Inspektur Umum Departemen Kehakiman; Laksamana Muda Sumitro, Inspektur Jenderal ABRI.

665. Para pejabat penting yang ditemui oleh KPN di antaranya adalah Gubernur Mario Carrascalão, Brigadir Jenderal Rudolf S. Warouw, dan Uskup Carlos Belo. Komisi itu juga mewawancarai 132 saksi.⁷⁷⁹

666. Komisi menilai bahwa Laporan Pendahuluan memilih versi kejadian yang dijelaskan dalam Laporan Warouw dan Polisi Militer yang paling awal: unjuk rasa tersebut bukanlah sebuah peringatan keagamaan untuk menghormati mendiang Sebastião tetapi suatu tindak kriminal yang direncanakan dengan hati-hati, didalangi oleh Fretilin. Sebagaimana militer, KPN menyalahkan para pengunjung rasa atas serangan terhadap dua orang petugas keamanan yang berada di luar Kodim, dan karena memprovokasi para petugas keamanan dengan bendera-bendera, spanduk, dan teriakan Fretilin mereka; dengan bersikap beringas, agresif, dan menyerang para petugas keamanan. Oleh karena itu, pasukan keamanan terpaksa membela diri

667. Sebagaimana laporan-laporan polisi militer, laporan KPN menemukan bahwa terdapat “sekelompok pasukan liar” yang tidak berseragam dan bertindak di luar kontrol dan komando. Disimpulkan bahwa pembantaian tersebut bukanlah suatu tindakan yang diperintahkan oleh, atau mencerminkan, kebijakan resmi, dan apa yang terjadi pada 12 November 1991 intinya merupakan sebuah tragedi yang seharusnya sangat disesali. Laporan tersebut menemukan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan prosedur penanganan huru-hara yang semestinya dan beberapa penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh petugas keamanan. KPN tidak menyepakati jumlah korban resmi yaitu 19 orang meninggal dan 91 luka-luka, mengutip suatu “dasar kuat” yang tidak jelas disebutkan dalam menyimpulkan bahwa jumlah korban mati dan luka-luka masing-masing lebih daripada 50 dan 91, tetapi tanpa mengidentifikasi para korban tersebut.

668. KPN mengkritik penanganan terhadap korban meninggal. Pada saat otopsi dilakukan, keluarga para korban tidak diberitahu dengan semestinya dan pengidentifikasian tidak ditangani secara layak. KPN merekomendasikan:

[A]gar keadilan dapat ditegakkan, harus diambil tindakan terhadap semua yang terlibat dalam insiden 12 November 1991 di Dili dan mereka yang dianggap telah melanggar hukum, dan mereka harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan Undang-Undang, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia.⁷⁸⁰

669. KPN tidak memperkuat rekomendasi ini dengan rekomendasi agar orang-orang yang menjadi tersangka diselidiki lebih lanjut dan dihukum.

670. Berdasar pada penyelidikannya sendiri terhadap situasi tersebut, Amnesty International pada khususnya mengecam keras KPN—dengan menyatakan bahwa komposisi keanggotaan KPN dan kerja yang dilakukan sangat buruk dan temuannya “tidak dapat diterima”.⁷⁸¹ Menurut Amnesty International, KPN memberikan kepercayaan yang berlebihan kepada laporan-laporan militer sementara itu seraya mengacuhkan atau menyalahartikan bukti independen yang mengatakan sebaliknya.

Wawancara dengan para saksi orang-orang Timor tidak dilakukan di tempat yang aman dan rahasia. Dalam kenyataannya, ke-132 saksimata yang bukan petugas keamanan berada di rumah sakit dan di tahanan pada saat mereka diwawancara.

671. Terlebih lagi, kesimpulan KPN bahwa para pengunjung rasa memprovokasi pasukan keamanan sama dengan mengatakan bahwa mengemukakan pendapat politik yang berbeda dapat menjadi pengesahan bagi penggunaan kekuatan mematikan atau tindakan di luar hukum lain terhadap warga sipil. Kritik terhadap pasukan keamanan hampir tidak dikemukakan. Amnesty International menuduh KPN telah gagal memperoleh perincian yang akurat mengenai jumlah dan identitas orang-orang yang meninggal dan hilang, serta mengenai sebab kematian dan keberadaan mereka, dan kehilangan arah ketika melakukan satu-satunya pembongkaran kuburan. Tidak ada rekomendasi spesifik untuk mengadili, di luar pernyataan umum bahwa tindakan hukum harus diambil terhadap mereka yang “terlibat” dalam “insiden” tersebut. Amnesty International juga mencurigai adanya halangan yang disengaja dilakukan terhadap investigasi independen dan pemantauan hak-hak asasi manusia setelah pembantaian.⁷⁸²

672. Pelapor Khusus PBB Ndiaye menganggap bahwa walaupun komisi ini—yang merupakan komisi penyelidikan Indonesia pertama terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia—merupakan sebuah inisiatif yang membesarkan hati, terdapat berbagai kekurangan yang mendasar sehingga menjadikan penyelidikan tidak bersesuaian dengan standar-standar internasional, khususnya standar yang tercantum dalam Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pencegahan dan Investigasi Efektif terhadap Penghukuman di Luar Hukum, Sewenang-wenang, dan Seketika:

- Institusi tersebut kurang memiliki kredibilitas karena kurang bersifat independen dari Negara dan tidak dipercaya oleh rakyat Timor-Leste;
- Para anggotanya kurang memiliki keahlian yang diperlukan dan tidak melakukan penyelidikannya dengan sikap profesional, sebagai contoh dengan menggunakan traktor untuk membongkar tempat yang diduga sebagai tempat penguburan;
- Sebagian besar penyelidikan terhadap para saksimata dilaksanakan di penjara atau di rumah sakit militer dan tampaknya dipantau oleh pasukan keamanan.

673. Kekhawatiran Pelapor Khusus begitu serius sehingga ia merekomendasikan sebuah komisi penyelidikan baru untuk melaksanakan penyelidikan tambahan.⁷⁸²

* Amnesty International mengatakan bahwa ICRC dihalang-halangi untuk berbicara secara pribadi dengan mereka yang ditahan berkaitan dengan kejadian-kejadian tersebut, termasuk mereka yang berada di rumah sakit; bahwa “pihak berwenang telah mengambil langkah untuk memastikan bahwa para saksi, aktivis hak-hak asasi manusia, dan para pengamat independen tidak dapat mendebatkan versi resmi dari kejadian tersebut. Beberapa saksi tersebut dikatakan telah dibunuh dan banyak yang ditahan”; bahwa LSM diancam, unjuk rasa dilarang, dan surat kabar diancam (dalam satu kasus tiga wartawan majalah *Jakarta Jakarta* dipecat setelah penerbit majalah mingguan itu secara resmi diperintahkan karena telah menerbitkan kesaksian 12 orang Timor-Leste yang menjadi saksi pembantaian itu); bahwa pembatasan secara ketat diterapkan atas akses terhadap dan laporan mengenai Timor-Leste oleh orang asing (Amnesty International, *Indonesia/East Timor, Santa Cruz: The Government Response*, Al Index: ASA 21/03/92, February 1992).

Tindakan yang diambil terhadap mereka yang bertanggung jawab

674. Meskipun gagal dalam proses investigasi, tindakan tetap diambil terhadap para perwira senior dan anggota militer berkaitan dengan pembunuhan di Santa Cruz. Selain itu, meskipun struktur militer di Timor-Leste tidak berubah hingga dua tahun berikutnya, terjadi pergantian-pergantian personel.

Tindakan terhadap para perwira senior

675. Pada 28 November 1991, sebelum KPN mengeluarkan laporan akhirnya, dua tokoh militer tertinggi di wilayah tersebut, Mayor Jenderal Sintong Panjaitan (Panglima Komando Daerah Militer Udayana IX) dan Brigadir Jenderal Rudolf S. Warouw (Panglima Kolakops Timor Timur), diberhentikan dari jabatannya.⁷⁸³

676. Pada Februari 1992, Kepala Staf Angkatan Darat menyatakan enam perwira bersalah karena melanggar peraturan, berdasarkan laporan Dewan Kehormatan Militer yang ia bentuk menurut instruksi Presiden Soeharto. Langkah-langkah pendisiplinan yang diambil, seperti telah dilaporkan oleh Indonesia kepada Komisi Hak-hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, membuahkan hasil berikut: tiga perwira dipecat dari tugas kemiliteran, dua perwira tidak diberikan jabatan apapun dalam struktur organisasi Angkatan Darat meskipun tetap aktif bertugas, dan satu orang tidak diberi jabatan dalam struktur organisasi untuk sementara.⁷⁸⁴ Pelapor Khusus Ndiaye diberitahu bahwa keenam perwira tersebut bertanggung jawab atas intelijen dan keamanan di Timor-Leste dan seharusnya mengambil langkah-langkah untuk mencegah demonstrasi tersebut.⁷⁸⁵ *Asia Watch* melaporkan bahwa para perwira tersebut adalah:

- Dipecat: Kolonel Infanteri Gatot Purwanto (Asintel Kolakops Tim-Tim); Kolonel Infanteri Binsar Aruan (Komandan Sektor C); Brigadir Jenderal Rudy [sic] Warouw (Panglima Kolakops Timor-Timur).
- Tidak memiliki jabatan tetapi masih aktif bertugas: Kolonel Infanteri Sepang (wakil panglima Kolakops Tim-Tim merangkap komandan komando resort militer 164/WD); Letnan Kolonel Infanteri Wahyu Hidayat (Komandan Kodim 1627/Dili).
- Tidak memiliki jabatan untuk sementara waktu tetapi masih aktif bertugas: Mayor Jenderal Sintong Panjaitan (Panglima Komando Daerah Militer Udayana IX).⁷⁸⁶ (Catat bahwa Sintong Panjaitan dilaporkan oleh organisasi yang sama telah dipecat pada 28 November 1991.)

677. Komisi belum berhasil memperoleh informasi mengenai kelanjutan pengadilan atau memeriksa dokumen atau bahan apapun yang mungkin dapat memberikan keterangan mengenai tindakan pendisiplinan ini. Namun, Komisi mencatat bahwa tidak ada proses hukum yang terbuka dan transparan yang dapat disaksikan atau diikuti oleh para korban dan keluarga mereka. Hal ini tidak menjadikan proses tersebut sebagai ganti rugi efektif untuk berbagai pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia. Komisi tidak memiliki kewenangan untuk memberi penilaian apakah para perwira yang dituduh mendapatkan keadilan dan proses peradilan selama pengadilan terhadap mereka.

Pembersihan internal

678. Para pengamat independen melaporkan bahwa terdapat pergeseran personel besar-besaran dalam tubuh komando di Timor-Leste setelah tragedi Santa Cruz. *Asia Watch* melaporkan bahwa keenam asisten Kolakops semuanya dipindahkan ke luar Timor-Leste, bersama dengan para komandan Kodim. Komandan komando resort militer juga diganti. Yonif 303 dipindahkan ke luar Timor-Leste pada November 1991.⁷⁸⁷

679. *Asia Watch* juga melaporkan bahwa tiga orang perwira diberi sanksi administratif: Letnan Kolonel Cheri Bolang, komandan staf komando resort militer; Kolonel Infanteri Dolgi Rondonuwu, asisten operasi Kolakops Timor Timur; dan Kolonel Infanteri Michael Suwito, asisten teritorial Kolakops Timor Timur.⁷⁸⁸

Pengadilan militer di Bali

680. Sepuluh personel keamanan berpangkat rendah yang terlibat dalam kejadian 12 November 1991 diadili dan dijatuhi hukuman di Pengadilan Militer Denpasar, Bali. Lama hukuman beragam mulai dari delapan sampai 18 bulan dan semua yang terbukti bersalah dipecat secara tidak hormat.

Tabel 43: Ringkasan dakwaan dan hukuman terhadap sepuluh personel keamanan terkait peristiwa Santa Cruz

| Nama | Kesatuan | Dakwaan | Keputusan dan hukuman | Catatan |
|-------------------|-----------------|--|-----------------------|--|
| Udin Syukur | Kodim 1627 | Tidak mematuhi atau melanggar perintah (Psl.103 KUHPM) | Dihukum 18 bulan | Melakukan atas kehendak sendiri. Menembakkan empat tembakan atau dua tembakan ke arah pengunjung rasa, tetapi tidak didakwa dengan dakwaan pembunuhan. |
| Aloysius Rani | Kodim 1627 | Tidak mematuhi atau melanggar perintah (Psl.103, 126, 124(1) KUHPM); Pasal 351 KUHP. | Dihukum 14 bulan | Melakukan atas kehendak sendiri. Menembakkan dua tembakan ke arah pengunjung rasa, tetapi tidak didakwa dengan dakwaan pembunuhan. |
| Petrus Saul Meda | Kodim 1627 | Tidak mematuhi atau melanggar perintah (Psl.103 KUHPM) | Dihukum 12 bulan | Melakukan atas kehendak sendiri. Menembakkan sepuluh atau tiga tembakan ke arah pengunjung rasa, tetapi tidak didakwa dengan dakwaan pembunuhan. |
| Mateus Maya (sic) | Kodim 1627/Dili | Tidak mematuhi atau melanggar perintah (Psl.103 KUHPM) | Dihukum 8 bulan | Berpatroli sebagai garnisun, menembak seorang asing (Kamal Bamadhaj). Tidak didakwa dengan dakwaan pembunuhan. |

* Informasi yang bertentangan dengan Laporan Polisi Militer Ketiga.

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|------------------|--|
| Afonso de Jesus | Kodim 1627/Dili | Tidak mematuhi atau melanggar perintah (Psl.103 KUHPM) | Dihukum 8 bulan | Berpatroli sebagai garnisun, menembak seorang asing (Kamal Bamadhaj) sebelumnya ia terlihat berada di antara para pengunjung rasa. Tidak kena. Tidak didakwa dengan dakwaan pembunuhan. |
| Mursanib | Dan Ki Gab atau perwira Sospol* | Tidak mematuhi atau melanggar perintah (Psl.103 KUHPM) | Dihukum 14 bulan | Kehilangan kontrol atas pasukan. |
| John Harlan Aritonang | Komandan peleton Yonif 303 II | Tidak mematuhi atau melanggar perintah (Psl.103 KUHPM) | Dihukum 12 bulan | Kehilangan kontrol atas pasukan. |
| Handrianus Edi Sunaryo | Komandan peleton Yonif 303 III | Tidak mematuhi atau melanggar perintah (Psl.103 KUHPM) | Dihukum 12 bulan | Kehilangan kontrol atas pasukan. |
| Yohanes Alexander Penpada | Perwira wakil intel untuk Korem 164 | Tidak mematuhi atau melanggar perintah (Psl.103 KUHPM) | Dihukum 8 bulan | Penyerangan terhadap para pengunjung rasa setelah terjadi penembakan. |
| Martin Alau | Polisi | Penyerangan, (Psl. 351 KUHP) | Dihukum 17 bulan | Melakukan atas kehendak sendiri. Menusuk dua kali, salah satunya memotong kuping seorang pengunjung rasa yang teridentifikasi (Simplicio Celestino de Deus). Semua tindakan tersebut dilakukan setelah penembakan. |

Keputusan untuk melakukan penuntutan

681. Setidaknya 72 personel keamanan terlibat langsung dalam berbagai tindak kekerasan di permakaman Santa Cruz, tetapi hanya 10 yang diadili. Semua anggota Kompi Gabungan, selain dua komandan peleton Yon 303 dan Letnan Dua Mursanib, lolos dari penuntutan. Patut dicatat bahwa komandan peleton Brimob, yang anakbuahnya melepaskan 33 tembakan tanpa perintah menembak, tidak dituntut.

682. Kegagalan menghukum anggota peleton Yonif 303 dari Taibessi juga luarbiasa karena Laporan Polisi Militer Ketiga secara spesifik mengidentifikasi tentara orang Timor-Leste yang merupakan anggota batalion ini dan komandan mereka sebagai tersangka. Penyelidikan menemukan bahwa mereka mendahului Brimob yang ragu-ragu dan menembak ke arah para pengunjung rasa. Para anggotanya termasuk Prajurit Jorge Barreto, Prajurit Antoni Beretus, Januariro Gutierrez, Venancio Barreto, dan Carlos Soares. Semuanya mengatakan bahwa mereka diperintahkan pergi ke Santa Cruz oleh komandan kompi mereka dan mereka menembak ke arah pengunjung rasa atas perintahnya.

* Informasi yang bertentangan diberikan oleh Mursanib.

683. Bahkan jika para prajurit ini tidak didakwa dengan dasar bahwa mereka mengikuti perintah,¹ tidak jelas mengapa perwira atasan mereka, Kapten Infanteri Yustin Dino (NRP.30011), tidak diadili. Laporan Polisi Militer Ketiga merekomendasikan Yustin Dino untuk dituntut dan telah disiapkan sebuah perkara tuntutan terhadapnya dengan alasan bahwa Yustin Dinolah yang memerintahkan sekitar 24 tentara Yonif 303 dari Taibessi ke Santa Cruz dan kemudian memerintahkan mereka menembak ke arah para pengunjuk rasa. Untuk beberapa alasan perkara ini tidak pernah diajukan.

684. Sebagai akibatnya, kesalahan akan mereka yang meninggal dan luka-luka di Santa Cruz dilimpahkan kepada Letnan Dua Mursanib, dua dari tiga komandan peletonnya, dan sekelompok elemen liar yang terdiri atas anggota-anggota perorangan Kodim, polisi, dan intelijen, serta dua anggota garnisun Kodim, semuanya disebut “bertindak atas kehendak sendiri”.

Kepatutan tuduhan yang dijatuhkan terhadap para anggota pasukan keamanan dan hukuman yang diberikan

685. Berbagai pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, dan penganiayaan yang keji terhadap warga sipil pengunjuk rasa terjadi di Santa Cruz. Hal ini tidak tecermin dalam tuntutan yang diajukan terhadap para anggota pasukan keamanan yang diadili. Hanya dua orang yang diadili berkaitan dengan serangan yang dilakukan di permakaman tetapi mereka dituntut untuk kegagalan mematuhi perintah atau kegagalan mengontrol anakbuah.

686. Alasan yang disampaikan kepada Pelapor Khusus PBB Ndiaye tentang alasan hanya dijatuhkan dakwaan ringan adalah karena tidak mungkin menghubungkan setiap pembunuhan dengan tentara satu per satu. Hal ini tidak meyakinkan karena dua alasan. Pertama, dimungkinkan melakukan uji balistik terhadap peluru yang diambil dari jasad yang diotopsi dan peluru dicocokkan dengan senjata tiap orang.¹ Kedua, sejumlah pembunuhan jelas berhubungan dengan pelaku perorangan. Laporan Polisi Militer Ketiga menemukan bahwa orang Malaysia, Kamal Bamadhaj, ditembak oleh dua tentara tetapi terkena tembakan Prajurit Mateus Maya (*sic*), yang sedang keluar patroli bersama garnisun. Namun, laporan dari jalannya persidangan militer di Bali mengindikasikan bahwa bukti ini diabaikan dan Mateus Maya (*sic*) hanya digambarkan sebagai yang menembak ke arah para pengunjuk rasa yang tidak dikenal pada saat membawa Mayor Gerhan Lentara yang terluka ke rumah sakit.²

.....
* Menurut Pasal 51 KUHP, seseorang tidak dapat dianggap bersalah jika orang tersebut bertindak se-
laras dengan perintah atasan dalam situasi tertentu. Prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa men-
genai Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pembunuhan di Luar Hukum, Sewenang-wenang,
dan Seketika menyatakan bahwa perintah dari seorang perwira atasan atau pejabat publik tidak dapat
dianggap sebagai pengesahan atas pembunuhan di luar hukum, sewenang-wenang, dan seketika.

† Komisi mencatat bahwa sebutir peluru yang dikeluarkan dari tubuh João Mica Alves diuji dan diketah-
ui berasal dari sebuah Mauser, yang digunakan sebagai bukti untuk menjadikan para pengunjuk rasa
sebagai tersangka.

‡ *Asia Watch, The Massacre Courts-Martial*, hal.4. Mengenai waktu, mungkin penembakan telah terjadi
ketika mereka kembali dari rumah sakit, karena dua staf Kodim terluka sekitar satu jam sebelumnya.

687. Pengadilan militer telah meremehkan keseriusan peristiwa yang terjadi pada 12 November 1991, dan meringankan hukuman yang dijatuhkan. Komisi mengesahkan temuan dari Pelapor Khusus PBB Ndiaye bahwa:

[K]etidaklayakan dakwaan dan hukuman ringan yang tak layak yang dijatuhkan oleh pengadilan militer terhadap beberapa anggota pasukan bersenjata yang dituduh terlibat dalam insiden 12 November 1991 samasekali bukan merupakan pemenuhan kewajiban untuk menghukum para pelaku dan oleh karena itu tidak bisa memberikan pencegahan terulangnya tragedi yang sama di masa depan. Sebaliknya, ia [Pelapor Khusus] merasa bahwa hukuman tersebut menggambarkan kecilnya penghormatan terhadap hak atas hidup oleh para pejabat penegak hukum di Timor-Leste. Di lain pihak, ke-13 warga sipil yang terlibat dalam unjuk rasa damai selama dan setelah 12 November 1991 dihukum dengan masa hukuman hingga penjara seumur hidup.⁷⁸⁹

688. *Asia Watch* juga mengkritik ringannya hukuman dan misteri seputar awal terjadinya penembakan atau apa yang terjadi terhadap jasad orang-orang yang terbunuh:

[K]ilasan yang mereka kemukakan terhadap perilaku militer pada tanggal 12 November merupakan sesuatu yang diatur secara hati-hati, yang digunakan untuk mendukung ‘versi resmi’ kejadian.⁷⁹⁰

Perkara atas Aloysius Rani

689. Komisi berhasil memperoleh terjemahan bahasa Inggris Berkas Perkara Aloysius Rani dari pengadilan militer di Bali.* Komisi juga telah memeriksa laporan-laporan *Asia Watch* mengenai Pengadilan Militer yang berlangsung di Bali antara 29 Mei dan 6 Juni 1992, juga laporannya yang berjudul *Remembering History in East Timor*, serta kumpulan dokumen militer Komisi yang berkaitan dengan Santa Cruz, dan Laporan Ndiaye.⁷⁹¹

690. Aloysius Rani adalah anggota Kodim yang bekerja memelihara peralatan, dan satu dari empat anggota pasukan keamanan yang dituduh telah bertindak “secara spontan”. Ia diadili karena mengambil senjata tanpa izin, pergi atas kehendak sendiri ke permakaman Santa Cruz, dan menembaki para pengunjung rasa dengan alasan ia sangat berkeberatan dengan tindakan para pengunjung rasa dan serangan mereka terhadap staf Kodim. Hal ini dapat dilihat kembali dalam laporan polisi militer kedua.⁷⁹²

.....
* Komando Daerah Militer, Udayana, Polisi Militer, Berkas Investigasi Perkara, No. DPP-10/A-09/Polisi Komando Daerah Militer IX/1992, April 1992. Dokumen-dokumen di dalamnya ini sama isinya dengan dokumen-dokumen yang ada di dalam dokumen-dokumen militer mengenai Santa Cruz yang dimiliki oleh Komisi (sebagai contoh, berbagai pernyataan mengenai tanggal tertentu diterjemahkan secara baik ketika dibandingkan dengan versi-versi aslinya). Oleh karena itu, CAVR percaya serta dapat menganggap dokumen ini sebagai suatu terjemahan yang dapat dipercaya dari sebuah berkas yang belum pernah dilihat versi aslinya oleh Komisi.

691. Perkara terhadap Rani terutama didasarkan pada kesaksian saksimata, pasukan keamanan, dan rakyat sipil, termasuk pengorganisasi unjuk rasa Gregório Saldanha.* Satu-satunya bukti Rani menembaki para pengunjung rasa berasal dari pengakuan Rani sendiri bahwa ia melancarkan dua tembakan. Tidak satupun dari saksi lain melihat Rani menembak seseorang. Pengakuan Rani “didukung” oleh sebuah foto senjata yang konon dia bawa (G.3, Senjata Nomor 059108, Popor Senjata Nomor 39) dan dua selongsong peluru. Tidak dilakukan uji balistik untuk mengonfirmasi apakah peluru-peluru tersebut telah ditembakkan dari senjata yang disebut di atas, dan tidak ada penjelasan mengenai di mana, kapan, atau bagaimana peluru-peluru tersebut ditemukan atau oleh siapa dan bagaimana dapat diketahui bahwa selongsong peluru tersebut merupakan selongsong peluru yang ditembakkan oleh Rani.

692. Komisi tidak begitu saja percaya dengan skenario kejadian yang dikemukakan oleh militer dalam perkara Rani. Bukan saja tentara Kodim ini bukanlah bagian dari Kompi Gabungan, tetapi juga ia bekerja memelihara peralatan di Kodim. Komisi mencatat bahwa setelah melihat dua staf Kodim yang terluka dibawa masuk, ia dengan cukup tenang kembali ke kantin untuk minum teh, tidak dikuasai oleh semangat patriotik sebagaimana diungkapkan. Ketika berada di kantin, dikatakan bahwa seseorang mengatakan kepadanya bahwa ia tertinggal sehingga ia mengambil sebuah senapan G3 dari ruang jaga tanpa izin dan menuju permakaman Santa Cruz dengan menggunakan taksi. Di sana, ia cukup tenang untuk menunggu Kompi Gabungan (bukan unitnya sendiri) dalam taksi tersebut sebelum bergabung dalam formasi Kompi tersebut. Kemudian ia melepaskan dua tembakan, bukan rentetan tembakan emosi seperti digambarkan.⁷⁹³

693. Penjelasan ini sangat tidak memadai dan tidak mengena sehingga Komisi menyimpulkan bahwa penjelasan ini digunakan oleh militer dengan tujuan mengambinghitamkan perseorangan tertentu dan dengan demikian menghindari tanggung jawab yang dibebankan kepada struktur komando militer.

Kesimpulan

694. Pihak berwenang Indonesia melaksanakan penyelidikan mengenai pembantaian Santa Cruz setidaknya melalui empat jalur: polisi sipil, komando militer setempat, polisi militer daerah, dan komisi penyelidikan yang dibentuk oleh Presiden. Terlepas dari jumlah personel yang terlibat dan jumlah laporan yang dikeluarkan sepanjang berbagai penyelidikan ini, Komisi berpandangan bahwa Indonesia tidak memenuhi standar seperti tercantum dalam Prinsip-prinsip tentang Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pembunuhan di Luar Hukum, Sewenang-wenang, dan Seketika. Khususnya kurangnya upaya “untuk menentukan sebab, cara, dan waktu

.....
* Dalam sebuah wawancara 2001 dengan Polisi Sipil UNTAET, setelah menceritakan bagaimana ia sering kali dipukuli di dalam tahanan oleh Sersan Martinus Wae dan lainnya, Gregório Saldanha mengatakan bahwa “Saya tidak ingat tanggalnya tetapi saya juga dipaksa menandatangani sebuah pernyataan bagi Aloysius Rani seorang tentara Angkatan Darat Indonesia yang didakwa oleh atasannya telah bertindak tanpa perintah. Saya tidak tahu nama orang yang memaksa saya menandatangani pernyataan tersebut”. (Gregório Saldanha, Wawancara dengan Polisi Sipil UNTAET, 31 Maret 2001).

kematian, orang yang bertanggung jawab, dan pola atau praktik yang mungkin menjadi penyebab kematian. Ini harus mencakup otopsi yang layak, pengumpulan dan analisis terhadap semua bukti fisik dan dokumenter dan pernyataan dari para saksi”. Memperkuat pendapat ini, Komisi mencatat bahwa:

- Tidak satupun dari berbagai penyelidikan ini cukup adil atau independen untuk disebut sebagai penyelidikan yang objektif dan dapat dipercaya. Polisi sipil, komando militer lokal di Timor-Leste, dan polisi militer semuanya merupakan bagian dari aparat yang sedang di bawah penyelidikan. Berbagai temuan mereka dan cara mereka melakukan penyelidikan menguak bahwa sejak awal peran mereka adalah untuk membebaskan lembaga militer dan mengecam para pengunjung rasa. Kedudukan ini hanya diperkuat dengan laporan yang dibuat oleh KPN, yang terdiri atas orang-orang yang merupakan bagian dari pemerintah Indonesia dan militer dan oleh karena itu tidak cukup independen dari aparat negara yang sedang diselidiki.
- Seluruh proses penyelidikan, termasuk penyelidikan KPN dan berbagai penyelidikan militer dan sipil, dilakukan secara diam-diam dan kurang transparan. Hanya Laporan Pendahuluan KPN yang dipublikasikan.⁷⁹⁴ Pengadilan militer terhadap enam perwira berpangkat rendah dilakukan secara terbuka, tetapi proses persidangan terhadap para perwira senior dilakukan dengan diam-diam.
- Berbagai dokumen yang telah diperiksa oleh Komisi yang sebelumnya bersifat rahasia mengungkapkan bahwa berbagai penyelidikan ini seluruhnya bias dengan cenderung memihak kepada pasukan keamanan dan memusatkan perhatian pada pembenaran terhadap berbagai tindakan pasukan keamanan. Tidak ada pengujian mengenai pertentangan antara kedua belah pihak; sebaliknya, versi kejadian yang diberikan oleh para perwira militer yang bertanggung jawab atas insiden tersebut diterima begitu saja. Laporan Warouw Pertama, yang menyampaikan versi tersebut ini, selesai sehari setelah pembantaian dan hanya didasarkan pada sumber-sumber militer.
- Terdapat kekurangan yang luarbiasa dalam penyelidikan di tempat kejadian perkara oleh semua penyidik. Polisi sipil tidak melaksanakan uji forensik samasekali di tempat kejadian kematian. Upaya “pembersihan” oleh militer tidak didokumentasikan secara layak dan dilakukan dengan cara yang memberikan peluang besar untuk merekayasa dan/atau menghancurkan bukti.
- Bukti dari para saksi yang diwawancarai oleh para penyidik menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di Permakaman Santa Cruz, yang tidak pernah diperhatikan oleh para penyidik, apalagi dipecahkan secara memuaskan. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang penting bagi klaim beladiri yang dikemukakan oleh personel militer tidak pernah diajukan oleh satupun penyidik sepanjang penyelidikan, menyisakan gambaran yang samar-samar dan tidak meyakinkan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Kesimpangsiuran ini begitu penting sehingga Komisi menyimpulkan bahwa kesimpangsiuran ini merupakan bagian dari upaya merekayasa kejadian pada 12 November.

- Ringannya dakwaan (melanggar perintah, penyerangan) dan hukuman bagi pasukan keamanan sepenuhnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan khususnya tidak dapat diterima melihat beratnya dakwaan dan hukuman yang dijatuhkan kepada para pengunjuk rasa. Hal ini bukan saja memperlihatkan ketidakseimbangan tetapi juga memperlihatkan manipulasi yang disengaja dan menghina proses peradilan kriminal. Bahkan jika pasukan keamanan yang telah dijatuhi hukuman benar-benar terlibat dalam pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, mereka tampaknya dijadikan kambing hitam untuk melindungi yang lain.

695. Secara keseluruhan, kerumitan tragedi Santa Cruz semakin kacau oleh apa yang tampak sebagai pembatasan kerusakan dan upaya sengaja oleh para wakil pasukan keamanan Indonesia untuk merekayasa sebuah versi tentang apa yang terjadi. Berbagai proses akuntabilitas yang diberikan sangat lemah dan tidak berimbang, serta melibatkan kerjasama antara militer, polisi, dan kehakiman. Komisi percaya bahwa versi kejadian di Santa Cruz yang secara sengaja dimanipulasi telah diberikan dan diterima oleh pengadilan militer dan pengadilan sipil yang menangani perkara ini. Berbagai penyelidikan dan persidangan tidak ditujukan untuk memperoleh kebenaran tentang mengapa pembantaian di Santa Cruz terjadi, bagaimana peristiwa tersebut terungkap, dan konsekuensi keseluruhan dalam hal nyawa manusia. Penyelidikan dan persidangan itu juga tidak bertujuan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab, tetapi lebih bertujuan melanjutkan dan memperkuat berbagai mekanisme impunitas kelembagaan yang melindungi para anggota ABRI/TNI yang terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM berat.

696. Pada 1994, Pelapor Khusus Ndiaye menyimpulkan bahwa para korban pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kerabatnya belum memperoleh ganti rugi yang efektif.⁷⁹⁵ Pemerintah Indonesia masih belum memberikan kepada para korban dan keluarganya baik informasi mendasar mengenai para korban yang meninggal dan hilang maupun keadilan atau perbaikan untuk kerugian yang mereka derita. Pemerintah Indonesia tidak mengumumkan informasi apapun yang akan berkontribusi kepada catatan publik mengenai apa yang terjadi, ataupun memberikan bantuan dengan menunjukkan lokasi atau mengidentifikasi orang-orang yang meninggal dan hilang. Ketidakpastian ini menjadi penyebab penderitaan berkepanjangan dari keluarga para korban. Hal ini merupakan pelanggaran berkelanjutan akan hak terhadap ganti rugi yang efektif, dan kegagalan memecahkan masalah orang-orang yang hilang merupakan pelanggaran berkelanjutan terhadap hak-hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban internasional Indonesia.

697. Kegagalan Negara Indonesia untuk menanggapi dengan semestinya berbagai tindak melawan hukum dari pasukan keamanannya telah melanggar kewajiban perjanjian sebagai suatu kekuasaan pendudukan untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran berat terhadap penduduk sipil (Pasal 146, Konvensi Jenewa IV).

Eksekusi di luar hukum dan penghilangan paksa (1992-1995)

698. Pada 1992 jumlah pelanggaran fatal yang dilakukan ABRI kembali berkurang secara signifikan dibanding rata-rata tahunan selama dekade sebelumnya. Pada Maret 1993, Komando Pelaksanaan Operasi (Kolakops) di Timor-Leste dihapuskan dan Korem kembali menjadi komando militer tertinggi yang bertanggung jawab atas struktur teritorial militer sepenuhnya, juga atas pasukan-pasukan nonorganik yang ditugaskan dari luar Timor-Leste baik untuk peran teritorial maupun tempur. Selama 1993 dan 1994 militer Indonesia melakukan relatif sedikit pelanggaran fatal.

699. Akan tetapi pada 1995, tidak saja terjadi peningkatan pelanggaran fatal oleh militer Indonesia, tapi juga pergeseran yang cukup mencolok ke barat dalam hal lokasi kejadian, ke Distrik Ermera, Bobonaro, dan Liquiça.

Januari 1995: Eksekusi-eksekusi di Gariana, Liquiça

700. Pada 12 Januari 1995, anggota-anggota Kodim Liquiça membunuh enam orang tak bersenjata di dekat *aldeia* Gariana, Vatuvou (Maubara, Liquiça), diduga pada saat mencari gerilyawan yang berpartisipasi dalam sebuah bentrokan bersenjata dengan ABRI hari sebelumnya di Desa Leotela (Liquiça, Liquiça). Orang-orang yang terbunuh adalah José Nunes, kepala kampung Gariana, Augusto Pinto, Abel Nunes, Victor, Americo de Araújo, dan Osorio Soares. Para saksimata yang kemudian berbicara pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang pembunuhan-pembunuhan itu melaporkan bahwa lima dari enam orang tersebut dibariskan di selokan dan dieksekusi.⁷⁹⁶ Kesaksian yang diberikan pada Komisi memperkuat dugaan bahwa keenam orang tersebut dieksekusi dan bahwa lebih daripada satu orang kemungkinan dipukuli sebelum dibunuh.⁷⁹⁷

Kesaksian Jacinta Alves Correia

Seorang saksi pembunuhan di Gariana adalah Jacinta Alves Correia. Jacinta, ibunya, dan ayahnya dipukuli oleh prajurit-prajurit Indonesia yang mengegedah rumahnya dalam pencarian mereka terhadap orang-orang yang dicurigai anggota Falintil. Dua dari orang-orang yang dibunuh adalah adik lelakinya, Americo dan Osorio. Dia memberikan kesaksian berikut tentang insiden itu kepada Komisi:

Ayah, ibu, kakak perempuan saya, adik Osorio dan Americo, kami semua ke kebun untuk membersihkan rumput jagung. Pada sore harinya pukul lima, kami kembali ke rumah. Ayah dan ibu menyuruh kami lima orang pulang duluan. Sampai di rumah, dua adik laki-laki yaitu Osorio dan Americo memasukkan kerbau ke dalam kandang. Saya dan kakak perempuan menjemur pakaian di atas pagar. Sementara kami menjemur pakaian dan kami membawa sabun

mandi untuk masuk dalam rumah, tiba-tiba kami melihat paman saya yang bernama Antonio membawa tasnya datang berlari masuk pintu rumah. Banyak tentara yang ikut di belakangnya.

Antonio adalah anggota Falintil. Ia masuk ke dalam rumah. Tentara mulai mengelilingi rumah kami. Dua orang adik laki-laki yang tadinya memasukkan kerbau datang dan memberi hormat kepada tentara yang datang. Tentara tidak menerima penghormatan dari mereka, mungkin marah. Saya bersama kakak dan anaknya, Joaquina yang berumur empat tahun itu, Osorio, dan Americo maju beberapa langkah dan memberi hormat kepada tentara, namun mereka hanya diam dan tidak menerima penghormatan itu. Ketika tentara datang, di antaranya satu anggota yang bernama Custodio membawa senjata dalam keadaan siaga penuh mengikuti Antonio. Mereka berdua baktusuk di dalam rumah.

Kami lima orang hanya berdiri terpaku dan melihat. Setelah itu Antonio lari kabur entah ke mana. Tentara menembak Antonio dari arah belakang, namun tidak kena. Lalu tentara kembali dengan senjata dan kali ini menuju ke Osorio dan Americo. Tentara memukul mereka berdua dengan senjata, ditendang dengan sepatu, dan lainnya melemparkan dengan batu. Saya datang untuk meminta maaf kepada tentara dan berkata: "Maaf bapak tentara, dua adik ini, kami semua ke kebun, baru saja pulang dan sementara mereka memasukkan kerbau dalam kandang." Mereka berkata: "apakah saya suamimu, atau pacarmu sehingga engkau bicara begitu pada saya?"

Mereka memukul punggung saya dua kali dengan senjata, dua kali di muka. Mereka juga memukul kakak saya dengan senjata. Mereka mengatakan begini : "Bunuh mati semua, jangan biarkan mereka berdua hidup." Lalu mereka datang berlari sambil membawa parang untuk membunuh saya dan kakak. Namun untung sekali mereka hanya pukul. Setelah itu, saya lihat tentara mulai pukul dua orang adik laki-laki itu. Tentara memukul dengan senjata, ditendang, lempar dengan batu, lalu Osorio mulai jatuh. Tampak Americo yang masih berdiri, tetapi mereka ikat Americo bersama empat orang lainnya dari Maubara: Abel, Victor, Augusto, dan José.

Setelah diikat bersama, mereka dibawa pergi, namun pada saat bersamaan ayah dan ibuku pulang. Ketika mereka berdua datang, tentara pun membawa parang dan berkata: "Bapak tua kau beruntung, andaikan tadi engkau ada di sini, engkau sudah mati." Tentara juga membawa parang memukul ayah dan ibu saya beberapa kali... Setelah itu, menarik mereka lima orang laki-laki ke dalam saluran air. Angkat bambu ikat pada kaki Osorio, menarik bersama mereka enam orang ke satu tempat saja yaitu dalam saluran air dan menembak mereka di tempat itu.⁷⁹⁸

701. Empat hari kemudian, tentara Indonesia kembali dan membakar rumah Jacinta.⁷⁹⁹ Pada Juni 1995, Jacinta Alves diterbangkan ke Bali, tempat dia memberikan kesaksian di hadapan sebuah komisi militer. Pada akhirnya, dua dari para pelakunya—Letnan Satu Jeremias Kase dan prajurit Timor-Leste Rusdin Maubere—dijatuhi hukuman masing-masing empat setengah dan empat tahun penjara, tapi tidak jelas apakah mereka menjalani hukuman tersebut.⁸⁰⁰

Eksekusi di Baucau dan Manatuto saat kunjungan wakil-wakil Uni Eropa (Juni 1997)

702. Pemuda Timor-Leste, khususnya yang ikut dalam demonstrasi-demonstrasi, sering menjadi sasaran kekerasan militer Indonesia selama periode ini. Sebagai contoh ketika sebuah delegasi Uni Eropa tiba di Baucau pada 29 Juni 1997 untuk bertemu dengan Monsignor Basilio do Nascimento, Uskup Baucau, sebuah demonstrasi pelajar untuk mendukung kemerdekaan Timor-Leste terjadi di luar Gereja Santo Antonio. Menurut sebuah laporan, sesaat setelah delegasi tersebut memasuki gereja, sebuah kelompok yang terdiri atas lima orang Timor dan Indonesia, berpakaian hitam, dan bersenjata senjata keluaran militer Indonesia, datang di demonstrasi tersebut dan mulai mengancam para pemuda yang berkumpul di sana.⁸⁰¹ Salah satu dari mereka dilaporkan menembak dan membunuh seorang siswa bernama Orlando da Costa. Sekitar tujuh pemuda lain terluka dalam bentrokan tersebut.⁸⁰² Tak lama setelah penembakan, pasukan militer Indonesia dari Kodim di Baucau, dipimpin oleh Komandan Kodim Letnan Kolonel Wisnu, tiba di lokasi. Bukannya mengambil jenazah dan mengejar pembunuhnya, Komandan itu justru memperingatkan para pejabat gereja bahwa mereka seharusnya tidak melindungi pendukung prokemerdekaan di dalam gereja. Pastor dari paroki Baucau harus turuntangan untuk mencegah bentrokan lebih jauh antara anggota militer Indonesia dengan para demonstran.⁸⁰³

703. Pada 16 Juni 1997, tak lama setelah kunjungan Uni Eropa, seorang pemuda lain ditembak mati oleh militer Indonesia di Aitas (Manatuto). Pembunuhan tersebut memicu protes-protes di Dili dan pada akhirnya pengakuan tanggung jawab oleh militer Indonesia.⁸⁰⁴ Seorang pemuda ketiga dibunuh pada 28 Juni dalam bentrokan antara pasukan militer Indonesia dan para pengunjuk rasa yang mencoba masuk ke Dili untuk kedatangan delegasi Uni Eropa.⁸⁰⁵

Eksekusi dan penghilangan di Alas, Manufahi (November 1998)

704. Tindakan militer Indonesia di Kecamatan Alas, Kabupaten Manufahi, pada November 1998 mengakibatkan sejumlah pembunuhan di luar hukum juga “penghilangan” dan penahanan tidak sah. Tampaknya pembunuhan-pembunuhan ini adalah pembalasan atas dua serangan pihak resistansi yang mengakibatkan kematian sejumlah prajurit Indonesia. Pada akhir Oktober 1998, anggota-anggota resistansi mengeksekusi empat orang yang dicurigai sebagai agen intelijen Kopassus di Same yang diduga telah mencoba menginfiltrasi sebuah pertemuan klandestin di kamp transmigrasi di Weberek, dekat Alas (Manufahi).⁸⁰⁶ Keempat orang

tersebut dilaporkan telah ditangkap, dilucuti senjatanya, diikat dengan tali, dan ditusuk dengan tombak oleh Falintil. Tiga dari empat orang itu tewas seketika. Orang yang keempat diduga melarikan diri ke Same, tapi kemudian meninggal. Setelah pembunuhan-pembunuhan tersebut, sebagian besar warga desa di Weberek melarikan diri ke pegunungan karena takut akan pembalasan ABRI. Meski dilaporkan bahwa sebuah patroli tentara Indonesia mengunjungi Weberek tak lama setelah pembunuhan-pembunuhan tersebut, tidak ada pembalasan langsung sampai setelah terjadi serangan Falintil terhadap Koramil di Alas.⁸⁰⁷

705. Pada pagi hari 9 November 1998, pejuang Falintil dan para pemuda sipil dari *aldeia* Lurik, Taitudak (Alas, Manufahi), menyerang Koramil di Alas.⁸⁰⁸ Tiga orang prajurit Indonesia terbunuh dan sekurangnya 11 orang ditawan oleh Falintil. Setelah serangan tersebut, kelompok yang terdiri atas sekitar 50 orang penyerang tersebut berpecah dalam dua kelompok menuju Turiscaï.

706. Segera setelah serangan Falintil tersebut, penduduk setempat melarikan diri ke gereja di Alas Kota, yang terletak sekitar 200 meter dari Koramil itu sendiri. Pada sore hari 9 November, Adriano Fernandes, yang dilaporkan berpartisipasi dalam serangan tersebut tapi tidak bersenjata, ditembak oleh prajurit-prajurit ABRI dari Koramil di Alas ketika dia lari menuju gereja untuk mencari perlindungan.⁸⁰⁹ Dilaporkan, tubuh Adriano Fernandes dipotong-potong dan dibuang di rawa yang terletak 50 meter dari jalan, di belakang markas militer dekat Dotik.⁸¹⁰ Menurut satu laporan, sesaat sebelum pembunuhan Adriano Fernandes, Danramil Antonio Pereira pergi ke gereja dan meminta diberitahu di mana senjata-senjata yang dicuri dari Koramil disembunyikan.⁸¹¹ Para tentara dari Koramil kemudian memaksa orang-orang yang mencari perlindungan di gereja untuk pindah ke gedung sekolah di seberang Koramil.⁸¹²

707. Pihak militer Indonesia mengintensifkan operasinya setelah serangan Falintil terhadap Koramil Alas, menangkap sejumlah besar orang dalam minggu-minggu berikutnya, dan menghancurkan ladang-ladang dan ternak milik warga Alas. Tak lama setelah serangan tersebut, tentara dari Batalion 744 tiba di Alas dan mulai mengejar kelompok penyerang tersebut ke utara menuju Turiscaï.

708. Pada pagi hari 13 November tentara Indonesia dari Batalion 744 menahan dan mengeksekusi Vicente Xavier, kepala desa Taitudak (Alas, Manufahi), karena diduga terlibat dalam serangan 9 November. Ia dieksekusi di rumah temannya di Bakiri, Fahinehan (Fatuberliu, Manufahi), tempat ia bersembunyi setelah kejadian tersebut.† Pada 13 dan 14 November, prajurit-prajurit ABRI dari Batalion 744 dan 745 juga menahan dan memukuli sejumlah orang di Alas Kota dan Lurin, dan mencoba membunuh orang-orang lain. Dalam satu kasus, seorang lelaki dilaporkan

* Human Rights Watch, *East Timor Massacre Reports Still Unconfirmed, Both Sides Must Respect Rights* [tanpa tanggal], <http://www.hrw.org/pres98/nov/etimor1123.htm> pada tanggal 19 Mei 2005; menurut Pernyataan HRVD 1531, dua orang ditahan selama tujuh hari dimulai dari 9 November.

† Pernyataan HRVD 1581 dan 3483. Komandan Korem, Kolonel Tono Suratman, mengonfirmasi kematian Vicente Xavier dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di harian Suara Timor-Timur, November 1998; lihat juga: <http://www.etan.org/et/1998/november/22-30/23killing.htm>.

diikat selama satu minggu sampai 19 November di Taitudak, ketika dia ditusuk dengan pisau di punggung, menembus dadanya.⁸¹³ Selama waktu itu, Vicente Sarmiento juga menghilang dari Dotik. Diduga ia dibunuh oleh tentara Indonesia dari Koramil Alas. Komisi telah menerima kesaksian bahwa beberapa hari setelah serangan tersebut, para anggota militer juga menggeledah rumah seseorang yang dicurigai sebagai simpatisan Falintil di Desa Bubususu (Fatuberliu, Manufahi). Mereka mencari dokumen-dokumen dan pemuda-pemuda yang terluka saat serangan di Alas. Dalam proses itu mereka membunuh sekurangnya satu orang.⁸¹⁴

709. Setelah pembunuhan-pembunuhan di Alas dan Fahinean (Fatuberliu, Manufahi), Batalion 744 terus beranjak ke utara, mencari anggota-anggota klandestin yang dicurigai terlibat dalam serangan tersebut. Dalam sebuah insiden pada 17 November, anggota Batalion 744 menembak Armando Enrique Perreira, yang juga dicurigai terlibat dalam serangan tersebut, serta Patricio dan seorang lelaki lain yang sedang bersama Armando saat itu.⁸¹⁵ Patricio meninggal akibat luka tembakan. Armando dan seorang pria kedua, Remecio, selamat dan kemudian dilaporkan telah dianiaya dan disiksa dengan parang, diangkut oleh sebuah helikopter militer, dan tidak pernah terlihat lagi.⁸¹⁶

710. Komisi punya alasan untuk percaya bahwa beberapa penduduk Alas lainnya telah dibunuh atau “dihilangkan” antara 9 November sampai Desember 1999. Dalam minggu-minggu berikutnya, 13 orang lagi diyakini telah dibunuh, semuanya anggota resistansi.⁸¹⁷ Sejumlah orang yang melarikan diri dari Alas setelah serangan tersebut dilaporkan ada di antara para pengungsi yang dibunuh dalam serangan terhadap rumah Manuel Carrascalão pada 17 April 1999.⁸¹⁸

Pendahuluan menjelang pembunuhan-pembunuhan oleh milisi pada 1999

711. Meskipun sebagian besar kelompok milisi secara resmi baru dibentuk pada 1999, beberapa kelompok sudah aktif sebelum itu. Jatuhnya Presiden Soeharto dan bangkitnya semangat Reformasi di Jakarta memungkinkan kampanye yang lebih terbuka oleh para pendukung kemerdekaan di Timor-Leste, termasuk meningkatnya aktivitas Falintil (lihat bagian 3.10 di bawah). Komisi telah menerima laporan tentang pembunuhan-pembunuhan yang dikaitkan dengan milisi selama tahun 1998. Beberapa dari kelompok-kelompok milisi ini sudah lama ada, namun yang baru juga mulai dibentuk. Sebagai contoh, Komisi menerima laporan tentang pembunuhan-pembunuhan oleh milisi Halilintar, yang mulai aktif di Bobonaro sejak 1994, pada Januari 1998, termasuk pembunuhan empat orang di Atabae oleh intelijen Indonesia dan satu kelompok milisi Halilintar yang dipimpin oleh Paul Gonçalves.⁸¹⁹ Aktivitas milisi dicatat di distrik-distrik Bobonaro, Baucau, Liquiça, Oecussi, Covalima, dan Manufahi pada periode ini. Komisi menerima kesaksian yang menyebut milisi-milisi Halilintar,⁸²⁰ Tim Saka,⁸²¹ Dadurus Merah Putih,⁸²² Darah Merah,⁸²³ Besi Merah Putih,⁸²⁴ Sakunar,⁸²⁵ Laksaur,⁸²⁶ dan Ablai⁸²⁷ sebagai pelaku dalam eksekusi-eksekusi di luar hukum selama 1998. Sebagian besar kesaksian ini adalah tentang pembunuhan-pembunuhan yang terjadi selama bulan-bulan terakhir 1998.

Tabel 44: Pelanggaran fatal dan penghilangan warga sipil yang dilakukan ABRI, 1990-1994, yang dilaporkan kepada CAVR

| Lokasi | 1990 | | 1991 | | 1992 | | 1993 | | 1994 | |
|------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | Dibunuh | Hilang | Dibunuh | Hilang | Dibunuh | Hilang | Dibunuh | Hilang | Dibunuh | Hilang |
| Lautém | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| Viqueque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baucau | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
| Manatuto | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Manufahi | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ainaro | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aileu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ermera | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| Covalima | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Bobonaro | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Liquiça | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dili | 1 | 1 | 21-34 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 5 | 4 | 34-47 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | - |
| Kombinasi | 9 | | 41-54 | | 6 | | 11 | | 4 | |

Tabel 45: Pelanggaran fatal dan penghilangan warga sipil yang dilakukan ABRI, 1995-1998, yang dilaporkan kepada CAVR

| Lokasi | 1995 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | |
|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | Dibunuh | Hilang | Dibunuh | Hilang | Dibunuh | Hilang | Dibunuh | Hilang |
| Lautém | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Viqueque | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Baucau | ? | - | 1 | - | 2 | 1 | 4 | - |
| Manatuto | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - |
| Manufahi | 3 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Ainaro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aileu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ermera | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | - |
| Covalima | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| Bobonaro | 1 | - | 2 | - | 5 | - | 15 | 1 |
| Liquiça | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Dili | 1 | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - |
| Tidak diketahui | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Total | 19 | 6 | 15 | 3 | 28 | 4 | 38 | 1 |
| Kombinasi | 25 | | 18 | | 32 | | 39 | |

Pelanggaran-pelanggaran fatal oleh Fretilin/Falintil, 1980-1999

712. Antara 1980 dan 1999 terjadi fluktuasi yang tajam dalam jumlah pembunuhan warga sipil oleh Fretilin/Falintil. Sulit untuk menentukan jumlah pembunuhan di luar hukum atas warga sipil yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil pada waktu manapun karena dua alasan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi Komisi mengakui bahwa mungkin lebih sedikit pelanggaran fatal oleh Fretilin/Falintil yang dilaporkan dibandingkan jumlah sebenarnya karena para korban yang masih hidup, saksi, atau anggota keluarga mungkin menolak untuk mengaitkan orang dan institusi yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan.

713. Di sisi lain, karena masyarakat Timor-Leste menjadi begitu termiliterisasi selama masa pendudukan Indonesia, status banyak warga sipil yang dibunuh oleh Fretilin/Falintil sering tidak jelas. Ini termasuk orang-orang yang secara paksa ditempatkan dalam bahaya, baik sebagai Hansip, TBO (Tenaga Bantuan Operasi), anggota-anggota kelompok milisi, atau orang-orang yang diwajibkan menjalankan tugas jaga malam. Komisi yakin bahwa tanggung jawab utama atas kematian dalam keadaan seperti ini harus dikenakan terutama pada pihak-pihak yang menempatkan korban dalam bahaya. Lebih lanjut lagi, peran-peran yang di Indonesia biasanya tidak terlalu termiliterisasi, termasuk peran Hansip dan kepala desa serta pegawai pemerintah sipil lainnya, menjadi sangat termiliterisasi di Timor-Leste pada masa pendudukan.

714. Karena garis pemisah antara petempur (*combatant*) dan nonpetempur (*non-combatant*) sering kali sangat kabur, berdasarkan informasi yang ada tidak selalu memungkinkan bagi Komisi untuk menentukan apakah suatu pelanggaran memang terjadi, dan bila memang terjadi, siapakah yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Semua kategori korban yang dibahas dalam bagian ini—'warga sipil', 'Hansip' dan TBO—harus dibaca dalam kerangka keterbatasan ini. Menurut data yang diterima Komisi, pelanggaran-pelanggaran fatal oleh Fretilin/Falintil yang dilaporkan paling banyak terjadi pada 1982, 1984, dan 1998-1999. Terjadi penurunan stabil dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan antara 1985 sampai awal 1990-an. Akan tetapi, setelah 1995 jumlah pelanggaran fatal berlanjut naik, dengan puncaknya pada 1999. Namun dalam semua tahun, jumlah pembunuhan warga sipil di luar hukum yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil lebih kecil dibandingkan jumlah pembunuhan yang dilakukan oleh ABRI/TNI dan para pendukungnya, dan dalam hampir semua tahun pembunuhan yang dilakukan Fretilin/Falintil jauh lebih kecil.

Eksekusi di luar hukum dan penghilangan paksa oleh Fretilin/Falintil pada 1980-an

715. Di awal 1980-an Falintil melancarkan sejumlah besar serangan pada permukiman yang dikontrol militer, yang sering disertai dengan pembakaran rumah-rumah. Sepertinya serangan-serangan ini dimaksudkan untuk menunjukkan pada penduduk yang saat itu berada di bawah kendali Indonesia bahwa Falintil masih ada dan kadang untuk memperingatkan, bahkan mengancam,

bahwa resistansi akan terus berlanjut.⁸²⁸ Dengan makin banyaknya warga sipil Timor yang direkrut paksa untuk ikut dalam operasi militer Indonesia, pasukan Fretilin/Falintil juga mulai menjadikan mereka sasaran saat terjadi pertempuran kecil dengan pasukan Indonesia.

716. Pada Agustus 1980 militer Indonesia memaksa warga sipil di Viqueque dan Baucau untuk berpartisipasi dalam Operasi Kikis untuk mencari sisa-sisa pasukan Falintil di sekitar Gunung Matebian.⁸²⁹ Selama operasi ini sejumlah warga sipil terbunuh, sebagian tertembak oleh Falintil dan yang lain terbunuh dalam tembakan-menembak antara pasukan ABRI dan pasukan Falintil. Sebagai contoh, Komisi mendengar tentang pembunuhan enam orang Timor oleh pasukan Falintil yang direkrut sebagai TBO untuk Operasi Kikis di Quelicai (Baucau).⁸³⁰ Dalam kesaksian lain, seorang deponen menyampaikan kepada Komisi tentang pembunuhan saudara laki-lakinya, dalam situasi yang sama:

*Pada bulan Juli 1980, kakak saya yang bernama Miguel, bersama seorang temannya Abilio Kuluina dipaksa oleh pasukan batalion 141 di Abere, Desa Luro untuk membawa barang-barang mereka menuju ke lokasi Luturo di hutan wilayah Laga. Sampai di sana mereka menginap selama tiga hari. Tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Fretilin sehingga terjadi tembakan-menembak antara ABRI/TNI dan Fretilin. Akibat penyerangan tersebut kakak saya tertembak dan akhirnya meninggal dunia.*⁸³¹

717. Komisi juga menerima informasi tentang beberapa kasus pada 1980 di mana anggota militer Indonesia memerintahkan para warga untuk mencari sendiri saudara-saudara mereka di hutan. Karena curiga pada para informan dan selalu khawatir akan diserang, Fretilin/Falintil menangkap, mengancam, dan kadang bahkan membunuh para warga sipil. Di Macadiqui (Uatolari, Viqueque) sebagai contoh, seorang informan memberitahu Komisi:

*Pada tanggal 6 September 1980, Sebastião Mau Lequi, Manuel Kaidawalita, Lorencu Kaidawalita, Julio Boru Kumu, dan Valente Noco Rau dipaksa oleh ABRI/TNI, Kepala Desa Vessoru José Fernandes, dan Kepala Rukun Keluarga di Waniuma, Afonso Mascarinhas, untuk pergi ke hutan mencari Falintil. Sampai di suatu daerah bernama Makhili mereka bertemu dengan Falintil dan ketika itu Sebastião Mau Lequi ditembak mati oleh Falintil. Keempat orang lainnya berhasil melarikan diri ke Uatolari kota.*⁸³²

718. Seorang deponen lain memberitahu Komisi tentang kasus-kasus serupa di Caicassa (Fatuberliu, Manufahi), pada 1980.

Pada tahun 1980, Miguel Maia, José Kehimau, Domingos Berleik dipaksa oleh ABRI/TNI untuk mencari senjata di hutan wilayah Caicasa. Setibanya di lokasi Uma Creda, di wilayah Caicasa, ketiga

orang tersebut ditangkap oleh Falintil. Tetapi Miguel Maia melarikan diri sehingga ditembak oleh Falintil. Ia hanya terluka di tangan kanannya. Sedangkan dua lainnya diikat lalu dibunuh oleh Falintil. Tubuh mereka dicincang lalu dibuang di lokasi tersebut.⁸³³

719. Komisi hanya menerima hanya satu laporan tentang eksekusi warga sipil oleh Falintil pada 1980. Dalam kasus ini Falintil mengeksekusi seorang laki-laki bernama Bere Alas yang dikatakan “bertentangan” secara politis dengan Fretilin, di Laclubar, Manatuto.⁸³⁴

720. Kontras dengan tahun sebelumnya, pada 1981 Fretilin/Falintil melaksanakan hanya sedikit sekali aksi militer. Komisi menerima hanya dua laporan warga sipil yang dibunuh oleh pasukan Fretilin/Falintil, yang keduanya terkait dengan Operasi Keamanan (yang juga disebut Operasi Kikis) dan dalam kedua kejadian korbannya dilaporkan adalah TBO.⁸³⁵

721. Terdapat beberapa kemungkinan alasan bagi terjadinya jeda pembunuhan ini. Pertama, pada Maret 1981 Fretilin mengadakan konferensi nasional di Mabai (Lacluta, Viqueque), yang berarti banyak komandan lokal bepergian atau disibukkan dalam reorganisasi politik setelah konferensi tersebut. Kedua, antara Juni dan September militer Indonesia melaksanakan Operasi Keamanan secara besar-besaran, di mana saat itu pasukan Fretilin/Falintil dipaksa bersembunyi dan mencari cara menghindari deteksi. Ketiga, banyak sekali korban jatuh di pihak Falintil di daerah Aitana pada September 1981, sehingga setelah itu perlu waktu untuk mengonsolidasi pasukan dan membangun kembali kontak antarkomandan.

722. Akan tetapi pada 1982, terjadi peningkatan dramatis dalam serangan-serangan Falintil baik pada target-target militer maupun nonmiliter. Kasus-kasus ini tersebar secara merata di seluruh bagian timur pulau ini (Manatuto, Manufahi, Viqueque, Baucau, dan Lautém). Sebagian dari serangan-serangan ini diarahkan pada pos-pos jaga desa, yang mengakibatkan kematian anggota-anggota pasukan pertahanan sipil ataupun warga sipil lainnya yang sedang bertugas jaga. Komisi mendengar kesaksian seorang korban serangan Falintil atas Desa Manumera (Turiscaí, Manufahi) pada 1982. Martinho de Jesus dan tiga orang lainnya, Manuel de Jesus, Filomeno de Jesus Borges, dan Mateus sedang tugas malam di pos jaga di Talimera:

Waktu itu kami berempat tertidur pulas. Tiba-tiba kami dibangunkan oleh Falintil yang telah mengelilingi kami. Kemudian tangan kami diikat ke belakang. Mereka berkata: “Kalian ini yang biasanya berlari duluan ke hutan sehingga TNI membuntuti kalian untuk mendapati kami di hutan. Malam ini kalian semua harus mati”. Kemudian Komandan (Falintil) yang bercelana putih dan tertutup wajahnya, mengambil parang dan memotong leher Mateus dan melemparkan Mateus sejauh sekitar 10 meter. Setelah itu ia kembali memotong lehernya Filomeno, lalu dibanting ke tanah. Ia kemudian mulai memotong leher kakak saya Manuel dan dibanting ke tanah. Setelah

itu ia menuju ke saya dan memotong leher saya sebanyak tiga kali dan juga membanting saya ke tanah. Tetapi leher saya tidak putus. Setelah mereka pergi, saya berusaha bangun dan melihat ketiga teman saya yang sudah mati. Saya berusaha untuk bangun dan berjalan sepanjang 20 meter. Saya duduk di dalam sebuah saluran air sampai pagi. Pada pagi harinya seorang datang mengambil ketiga jenazah dan saya untuk dibawa ke Turiscai kota. Saya kemudian dibawa dengan pesawat ke Dili untuk berobat.⁸³⁶

723. Pada awal 1982, Falintil juga diduga menyerang dan membunuh seorang anggota Hansip bernama Gaspar Soares, yang sedang berjalan pulang dari pasar dengan istrinya di Subdistrik Baguia (Baucau).⁸³⁷ Selain serangan-serangan terhadap pos-pos jaga, Fretilin/Falintil juga membunuh sejumlah warga sipil di bagian timur wilayah tersebut. Sebagai contoh, Komisi mendengar kesaksian tentang serangan berikut ini di Lore, di mana seorang perempuan terbunuh:

Pada tahun 1982 seorang anggota Fretilin/Falintil, yang identitasnya tidak diketahui, masuk ke Kampung Maloru, Desa Lore I (Lospalos, Lautém), dan menuju ke rumah Cecilia Sarmento. Ia mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah, dan memukul Cecilia sehingga ia berteriak-teriak, namun tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah untuk menolongnya karena ketakutan. Cecilia kemudian dibawa keluar dan rumah tersebut dibakar. Suami Cecilia yang bernama Marcos Sarmento, yang sedang bertugas jaga malam di Pos Siskamling, datang bertengkar dengan para anggota Fretilin/Falintil. Namun salah seorang anggota Fretilin/Falintil melukai lengan kanan Marcos Sarmento dan kedua tangan Marcos diikat ke belakang. Di depan suaminya, Cecilia Sarmento dibunuh dengan parang lalu mayat dibuang ke dalam kobaran api dari rumah yang sedang terbakar. Para pelaku masuk ke dalam dapur dan mengambil semua peralatan dapur, seperti piring, periuk, jerigen, dan saat para anggota Fretilin/Falintil itu meninggalkan kampung, mereka melepaskan tembakan secara bebas.⁸³⁸

724. Pada 1982 orang Timor-Leste ikut dalam pemilihan umum Indonesia untuk pertama kalinya. Fretilin/Falintil melancarkan beberapa serangan sebelum dan pada saat pemilihan, sepertinya sebagai upaya mempermalukan Indonesia dan membuktikan bahwa resistansi masih ada. Pada 14 April Falintil menyerang pos jaga di Leohat (Soibada, Manatuto), dan membunuh Antonio Lopes dan Antonio da Costa.⁸³⁹ Pada 24 April 1982, Falintil menyerang Desa Lugasa (Viqueque, Viqueque), membakar rumah-rumah, dan membunuh dua orang, João Soares dan Labi Mau.⁸⁴⁰ Satu hari sebelum pemilihan, Falintil dilaporkan telah melancarkan sejumlah serangan di Viqueque, yang menyebabkan pihak yang berwenang memindahkan semua tempat pemungutan suara ke dalam kota Viqueque.⁸⁴¹

725. Pada hari pemilihan, Falintil dilaporkan membunuh empat orang warga sipil di Bahoik (Iliheu, Manatuto, Manatuto). Seorang deponen menceritakan kepada Komisi:

Pada 5 Mei 1982, Falintil menyerang masyarakat di aldeia Bahadik, mengambil hartabenda dan ternak milik masyarakat. Semua masyarakat melarikan diri namun Falintil berhasil membunuh tiga orang: Casametan, Marae Cipriano, dan Olosaba...[D]i Metadolok, Falintil membunuh ayah saya Leki Mau, sedangkan kakak saya Altur Soares berhasil melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, ABRI/TNI memindahkan masyarakat Bahadik ke Lacro selama tiga hari. Setelah tiga hari masyarakat kembali ke kampung mereka semula, karena ABRI/TNI sudah menetap di sana sebagai keamanan untuk mereka.⁸⁴²

726. Falintil juga melancarkan serangan langsung sebelum atau pada hari-hari libur umum Indonesia atau hari-hari peringatan penting dalam kalender resistansi.* Pada 16 Agustus, sehari sebelum hari peringatan kemerdekaan Indonesia, pasukan Falintil membunuh dua orang anggota Hansip, Teofilo dan Julio Mendes, yang sedang bepergian ke kota Laga (Baucau).⁸⁴³

727. Serangan Falintil yang paling dramatis terjadi empat hari kemudian, pada 20 Agustus, yang merupakan hari peringatan berdirinya Falintil, di beberapa lokasi di Distrik Ainaro dan Manufahi; akan tetapi tidak ada informasi tentang korban warga sipil (lihat bagian tentang serangan Mau Chiga dan pembalasan ABRI pada paragraf 921 di bawah). Satu bulan setelah serangan tersebut, ketika militer Indonesia melaksanakan penumpasan brutal terhadap para warga sipil di Ainaro, pasukan Falintil sekali lagi melancarkan sebuah serangan di Distrik Manufahi. Seorang informan menuturkan kepada Komisi:

Tanggal 27 September 1982, pasukan Falintil menyerang dan membakar 13 rumah milik masyarakat di kampung Lurin [Taitudak, Alas, Manufahi]. Mereka menangkap Marcal, Domingos da Costa, Domingos, dan Bernardo, dan kemudian dibawa ke hutan. Selang beberapa hari kemudian, 3 orang korban melarikan diri dan kembali ke kampungnya, sedangkan korban Bernardo telah dibunuh oleh para pelaku.⁸⁴⁴

728. Para warga sipil yang bekerja di struktur pemerintahan lokal Indonesia juga dijadikan sasaran oleh Falintil. Pada 5 Oktober 1982, hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Falintil melaksanakan serangan berani atas Com (Moro, Lautém), dan membunuh sekretaris desa serta dua orang anggota Hansip. Seorang deponen memberitahu Komisi:

* Menurut salah seorang mantan Komandan Falintil, salah satu alasan untuk serangan-serangan pada hari besar nasional Indonesia adalah karena berkurangnya kesiagaan ABRI pada hari-hari semacam itu (Lihat wawancara Komisi dengan José da Conceição, Dili, 19 Oktober 2004).

Pada tanggal 5 Oktober 1982, jam 12 malam, segerombolan Fretilin, yang berjumlah sekitar 60 orang, dipimpin M231, menyerang Desa Com. Masyarakat dikumpulkan di bawah sebuah pohon beringin di kampung Vailovaia. Mereka lalu memanggil orang-orang, Francisco, Orlando, dan Modesto, yang dicurigai. Ayah saya, Francisco, langsung ditembak mati oleh M231, karena waktu itu ayah seorang anggota Hansip...Fretilin menganggap mereka adalah pengkhianat dan harus dimusnahkan. Setelah melakukan pembunuhan dan penjarahan, mereka [Fretilin] kembali ke hutan dan tidak kembali lagi ke Com.⁸⁴⁵

729. Segera setelah itu militer Indonesia memerintahkan sekelompok warga sipil untuk mencari gerilyawan-gerilyawan Falintil di hutan-hutan Moro. Seorang deponen menjelaskan pada Komisi:

Bulan Oktober 1984, ABRI/TNI batalion 315 menyuruh seorang bangsawan lokal dari Daudere bernama Paul untuk memanggil saya [Manuel Marques], José Cabral, José Celestino, Adão Soares, Nocomata untuk pergi ke hutan untuk mencari Fretilin. Kami menuju ke Malauro, dan besoknya ke Makaledo di wilayah Moro, dan ke Soruwaku di wilayah Maina I. Empat hari kemudian, Fretilin menangkap salah satu di antara kami, yakni José Celestino yang kami tugaskan untuk memasak...Pada siang harinya kami yang lain pulang untuk makan, ternyata Fretilin sudah menunggu kami di semak-semak. Kami disuruh membuang golok dan semua barang bawaan kami...Lalu seorang [anggota] Fretilin menikam Paul hingga tewas di tempat. Kami yang lain melarikan diri dan melaporkan kejadian ini kepada TNI Batalion 315.⁸⁴⁶

730. Suatu waktu pada 1982 Falintil juga menyerang Desa Carlilo (Aiteas, Manatuto) mengakibatkan terbunuhnya dua atau tiga orang.⁸⁴⁷

731. Seperti digambarkan oleh kasus-kasus ini, pada 1982 Falintil melancarkan serangkaian serangan terhadap pasukan militer Indonesia, anggota pertahanan sipil, dan warga sipil Timor yang direkrut untuk mengambil bagian dalam operasi militer. Kadang pasukan Falintil juga membakar desa-desa. Akan tetapi pada akhir 1982, perwira-perwira militer Indonesia berupaya melakukan kontak dengan para anggota Resistansi dan terjadi pengurangan dalam pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilakukan oleh ABRI maupun Fretilin/Falintil. Kontak damai pada Maret 1983 antara ABRI dan Fretilin menghasilkan sebuah periode empat bulan di mana jumlah pembunuhan baik oleh ABRI maupun Falintil menyusut tajam. Setelah pertempuran pada Agustus 1983 dan operasi militer Indonesia yang baru dan besar-besaran setelahnya, Fretilin/Falintil dilaporkan telah membunuh sangat sedikit penduduk sipil pada paruh kedua 1983.⁸⁴⁸

732. Tapi pada 1984, terjadi peningkatan serangan-serangan Falintil, termasuk pembunuhan warga sipil.⁸⁴⁹ Sebagian besar kasus terjadi di Lautém dan Viqueque. Data yang tersedia memberi kesan sangat kuat bahwa, sebagai tanggapan atas penindasan

militer yang brutal terhadap warga sipil dan operasi-operasi baru terhadap Resistansi, Falintil melakukan pembalasan. Komisi menerima laporan tentang delapan serangan di mana Falintil membakar rumah-rumah dan membunuh setidaknya satu warga sipil (dua kasus di Lautém, tiga di Viqueque, dua di Baucau, dan satu di Ainaro). Data tersebut memberi kesan bahwa sasaran utama serangan-serangan ini adalah individu-individu yang diketahui berkolaborasi dengan pasukan pendudukan (paling sering anggota Hansip), dan bahwa pembakaran rumah dimaksudkan sebagai peringatan pada seluruh masyarakat tentang konsekuensi jika berkolaborasi. Sebagai contoh, pada 10 Februari 1984 pasukan Falintil menyerang Uani Uma (Uato Carbau, Viqueque) membunuh seorang anggota Hansip dan tiga warga sipil dan membakar rumah-rumah. Seorang deponen menyampaikan kepada Komisi:

*Tanggal 10 Februari 1984, pasukan Falintil menyerang markas Hansip di Dusun Kaidilale, Desa Uani Uma, Kecamatan Uato Carbau menyebabkan korban anggota Hansip Sico Ana dan tiga orang lainnya mati tertembak. Sedangkan rumah milik Pedro, Luis, Martinho Pinto, Bernardo Loirei, Pedro, Gregorio, Antonio, dan Alberto dibakar oleh pelaku. Selain itu, 20 ekor kerbau Banpres [Bantuan Presiden] yang akan dibagikan kepada penduduk sipil juga dirampas oleh mereka. Malam itu, penduduk di dusun tersebut takut dan melarikan diri menuju desa lain hingga situasi aman.**

733. Dalam kasus lain di Ainaro, seorang deponen menjelaskan bahwa korban-korban serangan adalah orang-orang yang diketahui berasal dari keluarga-keluarga yang berhubungan dengan partai Apodeti:

Pada bulan November 1984, Komandan Falintil M232 bersama anggotanya menyerang area Cassa, lalu membakar rumah masyarakat serta membunuh dua orang, dato [bangsawan] bernama Maukoli dan Adolfo.⁸⁵⁰

734. Di tempat lain, warga sipil dibunuh dalam serangan Falintil terhadap anggota militer Indonesia, seperti digambarkan oleh kesaksian berikut ini dari Same(Manufahi):

Pada tahun 1984 kami pergi ke Gereja Same guna mengurus sejumlah surat. Setelah itu, saya pulang bersama dua tentara Indonesia, Pak Dor dan Pak Usi dan seorang bernama Manuel. Tepatnya di Bisakrem atau Groto, kami diserang oleh Falintil dan Pak Usi dan Manuel langsung tewas di tempat kejadian. Sedangkan saya kena tembak di belakang. Pada saat itu hujan deras dan berkabut, jadi saya tidak bisa mengenali Falintil yang menembak. Setelah saya sadar, saya dibawa oleh orang-orang ke rumah sakit Same bersama korban yang lainnya.⁸⁵¹

* Pernyataan HRVD 6001, 7521, dan 7515, yang melaporkan serangan tersebut terjadi pada 16 Februari 1984.

735. Penyerangan oleh Falintil pada 1984 tampaknya dilakukan dengan sasaran strategis. Meskipun terjadi banyak serangan Falintil pada 1984, Komisi hanya menerima dua laporan tentang warga sipil yang diperintahkan oleh militer Indonesia untuk mencari Falintil dan kemudian dibunuh.⁸⁵² Seorang deponen menjelaskan kepada Komisi tentang serangan Falintil di Builale (Ossu, Viqueque), tapi memberi pembenaran atas dasar politis:

Pada tahun 1984, di desa Builale pada jam 22.00 terjadi satu kejadian, yaitu para anggota Falintil...menyerang masyarakat, membakar rumah, dan merusak harta benda masyarakat di Builale...Bukan itu saja, tetapi membunuh seorang warga di sekitar itu bernama Olocai. Mereka melakukan itu [untuk] membuktikan kepada dunia internasional bahwa masih ada perang di Timor Lorosae.⁸⁵³

Tabel 46: Warga sipil dan Hansip/TBO yang dibunuh oleh Fretilin/Falintil, 1980-1984, yang dilaporkan pada CAVR

| Lokasi | 1980 | | 1981 | | 1982 | | 1983 | | 1984 | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | Sipil | Hansip | Sipil | Hansip | Sipil | Hansip | Sipil | Hansip | Sipil | Hansip |
| Lautém | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | - |
| Viqueque | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 10 | 7 |
| Baucau | 2 | - | - | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
| Manatuto | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - |
| Manufahi | - | - | - | - | 7 | - | - | 2 | 1 | - |
| Ainaro | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Aileu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ermera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Covalima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bobonaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liquiça | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Dili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 6 | - | - | 4 | 21 | 2 | 3 | 3 | 24 | 7 |
| Kombinasi | | 6 | | 4 | | 23 | | 6 | | 31 |

Pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil, 1985-1989

736. Selama 1985-1989 Falintil melancarkan banyak serangan terhadap ABRI dan pasukan Pertahanan Sipil. Juga ada banyak laporan tentang serangan Falintil terhadap penduduk desa. Satu kemungkinan alasan untuk hal ini adalah bahwa penindasan oleh Indonesia pada 1983-1984 telah merusak, dan di beberapa tempat menghancurkan, jaringan klandestin yang mendukung Resistansi, sehingga Fretilin/Falintil terpaksa mendapatkan makanan dan persediaan dengan menggunakan kekuatan.

737. Apabila pada 1984 serangan-serangan oleh Falintil terhadap sasaran-sasaran militer dan sipil mulai muncul kembali, pada 1985 dan 1986 terjadi pergeseran yang cukup berarti ke arah pertempuran langsung antara ABRI dan pasukan Falintil. Sebuah publikasi militer Indonesia melaporkan bahwa ABRI kehilangan 122 anggotanya pada 1985 dan 169 pada 1986, setelah itu angka-angka tersebut menjadi jauh lebih rendah. Serangan Falintil yang paling dramatis terjadi pada 1987 ketika Falintil membunuh tiga puluh anggota zen tempur di Iliomar, Lautém.⁸⁵⁴ Peningkatan kontak senjata langsung antara ABRI dan Falintil dibarengi dengan penurunan dalam angka kematian warga sipil yang dilakukan oleh Falintil.

738. Walaupun demikian, selama periode ini terjadi sejumlah perkembangan yang patut dicatat. Pertama, terjadi penurunan tajam dalam serangan-serangan Falintil di mana kampung-kampung penduduk sipil dibakar: empat kasus pada 1985, tidak ada kasus pada 1986, satu pada 1987, satu pada 1988, dan tidak ada kasus pada 1989.⁸⁵⁵ Kedua, pada 1985-1986, setengah dari korban yang dibunuh oleh Falintil adalah Hansip: dua di Iliomar, empat di Viqueque, dan tujuh di Manufahi. Dan yang paling signifikan, pelanggaran-pelanggaran fatal oleh Falintil bergeser dari basis-basis biasa Falintil di Lautém, Viqueque, dan Baucau ke distrik-distrik tengah seperti Manatuto dan Manufahi. Sebagai contoh, seorang deponen menuturkan kepada Komisi tentang serangan Falintil atas Desa Manehat (Barique/Natarbora, Manatuto), di mana rumah-rumah dibakar dan beberapa warga sipil dibunuh:

Pada tanggal 5 Mei 1985, pada malam hari, wilayah Manehat diserang oleh pasukan Falintil. Dalam penyerangan tersebut Falintil membakar 15 rumah milik masyarakat Manehat termasuk rumah saya [João de Carvalho]. Selain membakar, para pelaku juga menembak mati dua orang penduduk dan mencederai satu orang. Falintil juga melakukan perampasan terhadap harta milik masyarakat antara lain makanan, pakaian, dan ternak.⁸⁵⁶

739. Peningkatan dalam kasus-kasus seperti itu di Manatuto pada 1985 mungkin terkait dengan konflik politik yang sedang berlangsung di dalam tubuh Fretilin—termasuk menghilangnya komandan Falintil Kilik Wae Gae dan menyerahnya Mauk Moruk—serta penunjukan komandan-komandan Falintil baru di wilayah tersebut.

740. Pada 1987, ketika Indonesia kembali menyelenggarakan pemilihan umum, terjadi peningkatan jumlah warga sipil yang terbunuh oleh Falintil tapi tidak ada laporan tentang Hansip yang terbunuh. Setidaknya satu (dan mungkin lebih dari satu) serangan Falintil pada 1987 terkait langsung dengan pemilihan umum tersebut. Seorang deponen menceritakan kepada Komisi tentang serangan Falintil terhadap kelompok yang membawa kotak-kotak pemungutan suara di Natarbora, Manatuto.

.....
* 35 Tahun Darma Bakti Kostrad, (informasi bibliografi tidak tersedia), hal. 86-88. Pola ini kurang lebih bersesuaian dengan data yang dikumpulkan oleh Komisi dari Pemakaman Pahlawan Militer Indonesia di Timor Timur, meskipun data-data ini menunjukkan angka tertinggi 62 pada 1985 dan 32 pada 1986, di mana sesudahnya total tahunan serendah 20-an.

Suami saya bernama João Oscar bersama tiga temannya, Americo, Mario Belo, dan Sebastião Alves (milsas), pergi ke Betano [Same, Manufahi] menumpang traktor...dengan tujuan mengambil kotak-kotak Pemilu. Setelah kembalinya dari Betano, di tengah perjalanan mereka dihadap oleh kelompok Falintil dan menembak mati mereka. Semua. informasi ini saya dapatkan dari teman-teman suami saya yang mengambil mayatnya di lokasi kejadian dan membawa ke rumah saya.⁸⁵⁷

741. Seperti halnya lima tahun sebelumnya, pada 1987 Falintil juga melancarkan serangan-serangan pada 17 Agustus, hari peringatan kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1987, pada pukul 21.00, empat anggota Falintil menyerang kampung Besusu di desa Uma Berloik [Alas, Manufahi]. Saya [Joaquina Fernandes] tidak mengenal mereka tetapi tahu bahwa mereka adalah dari Falintil...Dalam serangan itu para pelaku membakar rumah milik tetangga dan melakukan tembakan untuk menakuti masyarakat. Kami lagi berpencar untuk menyelamatkan diri di sawah sekitar kampung itu...Saat itu, dari sawah saya berteriak pada suami saya [Duarte Vassalo] untuk cepat keluar dari rumah. Saat lari keluar dari rumah suami saya langsung ditembak mati oleh para pelaku dan tewas di tempat karena terkena tembakan pada bagian telinga hingga tembus. Dalam kejadian itu para pelaku membakar tiga buah rumah.⁸⁵⁸

742. Tidak seperti tahun-tahun yang bergejolak pada pertengahan 1980-an, Komisi menerima sangat sedikit laporan tentang pelanggaran fatal yang dilakukan oleh Falintil pada 1988 dan 1989. Kebanyakan pembunuhan ini tampaknya mengincar orang-orang tertentu yang berkolaborasi dengan militer Indonesia atau, dalam satu kasus, seorang mantan pejuang Falintil yang telah menyerah dan kembali ke komunitasnya.^{*}

Tabel 47: Warga sipil dan Hansip/TBO yang dibunuh oleh Fretilin/Falintil, 1985-1989, yang dilaporkan pada CAVR

| Lokasi | 1985 | | 1986 | | 1987 | | 1988 | | 1989 | |
|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | Sipil | Hansip |
| Lautém | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Viqueque | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Baucau | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Manatuto | 6 | - | - | - | 9 | - | 1 | - | 3 | 1 |
| Manufahi | - | - | 1 | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |

^{*} Untuk yang terakhir, lihat Pernyataan HRVD 0666. Catat juga bahwa satu serangan dan pembunuhan pada 1989 terjadi pada hari kemerdekaan Indonesia; lihat Pernyataan HRVD 3037.

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Ainaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aileu | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ermera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Covalima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bobonaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liquiça | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 10 | 6 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Kombinasi | | 16 | | 13 | | 11 | | 6 | | 5 |

Pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilakukan oleh Fretilin/ Falintil, 1990-1998

743. Melanjutkan kecenderungan yang terbentuk pada akhir 1980-an, hanya sedikit laporan yang masuk kepada Komisi mengenai pelanggaran-pelanggaran fatal oleh Falintil selama paruh pertama tahun 1990-an. Kecenderungan ini dapat dijelaskan oleh beberapa perkembangan yang saling terkait. Pada 1987 resistansi bersenjata, Falintil, secara resmi dipisahkan dari Fretilin, dan diambil sebuah kebijakan baru yang mengubah fokus perjuangan menjadi protes urban. Meskipun Falintil tetap hidup dan mampu secara militer, perubahan kebijakan ini memberi keutamaan pada demonstrasi-demonstrasi umum di perkotaan ketimbang taktik yang dipakai Falintil sebelumnya yakni menunjukkan bahwa dirinya masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan melalui unjuk kekuatan di pelosok-pelosok. Kecenderungan ini semakin dipercepat oleh keputusan Indonesia pada akhir 1988 untuk “membuka” Timor-Leste pada orang-orang Indonesia, memberi kebebasan bergerak yang lebih besar, dan mengizinkan turis asing mengunjungi wilayah ini. Perubahan kebijakan oleh Indonesia ini memperkuat fokus baru pada protes perkotaan tanpa kekerasan. Pada saat yang sama keputusan untuk menjalankan strategi ‘persatuan nasional’ dan membangun basis dukungan bagi Resistansi yang seluas-luasnya, termasuk mengajak orang Timor-Leste yang berkolaborasi dengan Indonesia, mungkin juga telah turut menyumbang pada penurunan kekerasan pada tahun-tahun ini.

744. Akan tetapi antara 1996 dan 1998 terjadi lonjakan yang tiba-tiba dalam pelanggaran fatal yang dilakukan oleh Falintil. Terdapat beberapa ciri menonjol dalam pembunuhan-pembunuhan ini. Pertama, tidak seperti pada 1980-an ketika mayoritas warga sipil yang dibunuh oleh Fretilin/Falintil berada di bagian timur wilayah, pada akhir 1990-an kasus-kasus ini tersebar merata antara timur (Lautém, Viqueque, dan Baucau) dan barat (Ermera, Covalima, Bobonaro, dan Liquiça). Pergeseran ini mencerminkan adanya perubahan kepemimpinan di Timor Leste setelah tertangkapnya Xanana Gusmão. Walau Xanana Gusmão tetap menjadi Panglima Tertinggi Falintil selama di penjara, Konis Santana, dalam kapasitasnya sebagai kepala staf CNRM, bertindak sebagai komandan harian Falintil dan mendirikan basisnya di Ermera (lihat Bagian 5. Resistansi: Struktur dan Strategi).

745. Kedua, tidak seperti pada 1980-an ketika Falintil menjadikan sasaran para anggota pasukan Hansip, pos-pos jaga yang dihuni warga-warga sipil, orang-orang yang sedang berburu, atau orang-orang yang dikirim mencari Falintil, pada akhir 1990-an sebagian besar eksekusi di luar hukum oleh Falintil ditujukan pada para kolaborator atau warga sipil yang bekerja sebagai mata-mata bagi militer Indonesia.*

746. Akan tetapi, Falintil sesekali tetap melancarkan serangan terhadap militer Indonesia dan para anggota kelompok-kelompok Hansip, juga warga sipil yang sedang bertugas jaga. Pada Maret 1990, sebagai contoh, Falintil menyerang sebuah pos jaga di Carlilo (Aiteas, Manatuto, Manatuto). Seorang deponen menyampaikan kepada Komisi:

Pada tanggal 23 Maret 1990, saya [Mateus Soares Mauk] bersama dengan teman-teman saya masing-masing bernama José Soares Laka, Domingos Ramos, Sebastião Ximenes, Antonio Coli, Domingos Larak, Hermenegildo Soares, dan juga ayah saya Antonio Celo Soares, sedang jaga malam di Pos Kamling di Carlilo, Kampung Baru. Sekitar jam 9 malam terjadi penyerangan yang dilancarkan oleh Falintil ke pos tersebut dan dari penyerangan itu ayah saya Antonio Celo Soares meninggal dunia seketika, sedangkan saya bersama dua orang teman lainnya José Soares Laka dan Domingos Larak terluka masing-masing di bagian paha, pantat, dan kaki akibat tembakan. Saat penyerangan itu berlangsung sebagian kelompok dari Falintil merampas jagung, beras, dan pakaian, dan seekor babi milik Mateus Go⁸⁵⁹.

747. Serangan dan eksekusi Falintil di rumah seorang guru sekolah bernama Castelo di Fuiloro (Lospalos, Lautém) memberi gambaran mengenai penargetan orang-orang yang dipandang sebagai kolaborator. Pada malam hari 28 Mei 1997 Castelo, keluarganya, dan beberapa guru Indonesia sedang menonton televisi ketika gerilyawan Falintil tiba di rumah tersebut dan bertanya mengapa mereka menandatangani dokumen yang mendukung integrasi Timor-Leste dengan Indonesia. Castelo, dua orang anaknya, dan seorang teman tertembak, dan ketika guru-guru lain berusaha melarikan diri mereka juga ditembak. Komisi menerima kesaksian berikut dari istri salah seorang korban:

Pada tanggal 28 Mei 1997 pada jam 18.20 malam di kampung Ira-Ara, Lospalos, suami saya EP datang ke rumah C untuk melihat mereka memasang parabola. Tidak lama kemudian sekelompok Falintil menyerang rumah C dan bertanya pada Z, adik kandung saya: “Di mana C?” Kemudian Z mengatakan bahwa C ada di dalam rumah dan mulailah terdengar tembakan senjata di sekitar perumahan guru dan [di] rumah C. Setelah itu saya, E, bermaksud untuk melihat apa

* Meskipun terdapat juga kasus-kasus di mana Falintil salah membunuh orang yang dimaksudkan (lihat Pernyataan HRVD 4156).

yang terjadi di rumah C, tetapi bunyi tembakan senjata terus berlanjut dan [saya] terpaksa ... bersembunyi di celah-celah bunga. Setelah bunyi senjata berhenti jam sepuluh, saya mendatangi rumah C untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Sampai [di rumah] saya lihat suami saya, EP, tergeletak di lantai dalam keadaan tidak bernyawa dan teman-temannya C, V, dan B.⁸⁶⁰

748. Sebuah contoh lain tentang serangan Falintil terhadap para warga sipil yang bekerja bagi militer Indonesia, disampaikan oleh seorang deponen di Dilor (Lacluta, Viqueque):

*Manuel de Araújo direkrut paksa oleh Kopassus menjadi mata-mata terhadap Falintil di hutan dan membawa kembali informasi ke Kopassus. Pekerjaan itu dilakukan terus hingga tanggal 1 Juli 1996 ketika Manuel de Araújo bersama temannya Andre Sarmiento pergi ke hutan mengambil tuak. Sorenya kami mendengar bunyi tembakan... karena mereka tidak kembali hingga malamnya, kami melaporkan [hal itu] ke komandan Kopassus dan komandan Koramil...pada keesokan harinya, 2 Juli 1996, Komandan Kopassus Raul, wakilnya Mamat, Komandan Milsas bernama Filipe Parada, seorang anggota Koramil bernama Jacinto, Babinsa bernama Julio Riberu, seorang Binpolda bernama Lorenzo, kepala desa Jose Maria Soares, dan masyarakat Dilor pergi ke Kulu Uhi untuk mencari Manuel dan Andre. Mereka menemukan jenazah keduanya. Mereka meninggal bukan karena tembakan tetapi karena tangan mereka diikat ke belakang, dipukuli dan ditikam dengan pisau, dan kepala mereka dilempar dengan batu. Tubuh mereka digantung di pohon.**

749. Ciri menonjol ketiga serangan Falintil yang patut dicatat pada periode ini adalah rangkaian aksi yang terkait dengan pemilihan umum pada Mei 1997. Pada awal Mei Falintil menyerang sebuah truk yang membawa anggota Brimob di Subdistrik Quelicai (Baucau), dan membunuh beberapa orang di antaranya.⁸⁶¹ Beberapa hari sebelum pemilihan umum yang jatuh pada 25 Mei, anggota klandestin, bekerja sama dengan Falintil, melancarkan serangan yang berani terhadap kompleks Brimob di Bairo Pite, Dili. Beberapa warga sipil dilaporkan telah terbunuh dalam serangan tersebut, walaupun pernyataan-pernyataan yang diterima Komisi menunjukkan bahwa mereka terkena tembakan dari arah kompleks Brimob dan bukan dari para penyerang.⁸⁶²

750. Juga terjadi kasus di mana para anggota Falintil melakukan apa yang sesungguhnya bisa dikatakan sebagai tindakan kriminal terhadap warga sipil. Seorang deponen dari Akaderu Laran (Kakae Uma, Natarbora, Manatuto) menceritakan kepada Komisi:

* Pernyataan HRVD 00474.

Tanggal 13 Februari 1994, sekitar jam sembilan ada penyerangan oleh Falintil. Ketika itu ibu saya, Faustina Soares, baru keluar dari dapur mau masuk ke dalam rumah dan ditembak oleh Falintil dua kali sehingga satu peluru kena di kepala ibu saya. Faustina Soares meninggal seketika. Pada saat ibu saya Faustina meninggal, istri saya Antoneta Lopes keluar dari kamar sempat melihat seorang Falintil yang berambut gondrong tampak belakang ketika dia mau pergi. Saat itu juga Falintil sempat mengambil tiga sak pupuk yang dikira beras, dan saat itu pula saya [Elizio] sempat berteriak bahwa kalian bukan laki-laki, tidak mencari musuh tetapi membunuh rakyat kecil yang tidak bersalah.⁸⁶³

Pelanggaran fatal oleh Falintil pada 1999

751. Sama halnya dengan eksekusi di luar hukum yang dilakukan oleh militer Indonesia dan milisi, pembunuhan (dan penghilangan) warga sipil oleh Falintil pada 1999 dapat dibagi ke dalam tiga periode: (i) Januari sampai akhir Mei; (ii) periode UNAMET dari permulaan Juni sampai Jajak Pendapat pada 30 Agustus; dan (iii) September sampai akhir Oktober.

752. Pola pembunuhan warga sipil oleh Falintil selama ketiga periode ini kurang lebih serupa dengan pola pembunuhan oleh militer Indonesia dan kelompok-kelompok milisi, walaupun dengan skala yang jauh lebih kecil sepanjang periode: jumlah kasus yang relatif besar dilaporkan di paruh pertama dan ketiga dari periode, sementara hampir tidak ada kasus pembunuhan selama masa kehadiran UNAMET antara Juni sampai pemungutan suara pada 30 Agustus. Selain itu, seperti halnya pembunuhan oleh kelompok-kelompok milisi dan militer Indonesia, pelanggaran fatal oleh Falintil terkonsentrasi terutama di distrik-distrik barat, lebih khususnya lagi di Ermera dan Bobonaro. Hampir sepanjang 1999 Falintil berada di bawah perintah komando tertingginya untuk tidak menanggapi kekerasan milisi. Oleh karena perintah ini nyatanya secara umum diindahkan dan jumlah insiden yang dilaporkan relatif kecil, tingkat tanggung jawab institusional atas pelanggaran-pelanggaran yang memang terjadi tidak mungkin besar.

753. Komisi telah menerima laporan-laporan tentang 11 pelanggaran fatal (pembunuhan dan penghilangan) yang dilakukan oleh Falintil antara Januari dan Mei: pada Februari tiga orang warga sipil dibunuh di Covalima; pada Maret dua orang warga sipil dibunuh di Ermera; pada April dua orang warga sipil "hilang" di Baucau dan satu orang dibunuh di Bobonaro; dan pada Mei orang-orang dieksekusi satu-satu di Ermera, Covalima, dan Liquiça. Dalam hal jumlah pelanggaran, identitas para korban, dan lokasi, kasus-kasus ini tampaknya merupakan kelanjutan dari pola yang tampak selama tiga tahun sebelumnya. Dari semua kasus ini, satu yang memiliki konsekuensi yang paling besar selama paruh pertama 1999 adalah pembunuhan Manuel S. Gama, mantan camat Cailaco (Bobonaro), tokoh pro-otonomi yang sangat dikenal, dan prajurit Indonesia, di dekat Desa Porogoa (Cailaco, Bobonaro) pada 12 April 1999. Kematianya berakibat pada penumpasan besar-

besaran di Cailaco sampai keluar wilayah tersebut oleh TNI dan sekutu milisinya, serta mobilisasi kelompok-kelompok milisi baru di distrik Bobonaro (lihat paragraf 779 - 781 di bawah ini untuk gambaran selengkapnya).⁸⁶⁴

754. Selama periode UNAMET, dari Juni sampai Agustus, pelanggaran-pelanggaran oleh Falintil hampir berhenti. Komisi menerima hanya satu laporan tentang penghilangan seorang lelaki di Distrik Baucau.⁸⁶⁵ Juga patut dicatat bahwa pada 16 Mei, pasukan Falintil di Subdistrik Lolotoe (Bobonaro) menyerang para anggota militer Indonesia dan anggota milisi, dan membunuh tiga di antara mereka.⁸⁶⁶

755. Ketika hasil Jajak Pendapat diumumkan, militer Indonesia dan milisi melancarkan serangan besar-besaran terhadap penduduk sipil dan menghancurkan gedung-gedung publik dan pribadi di seluruh wilayah ini. Meskipun Falintil terus dikantonisasi, di distrik-distrik barat Ermera, Bobonaro, dan Liquiça anggota pasukan Falintil juga melaksanakan apa yang tampaknya merupakan pembunuhan balas dendam terhadap individu-individu yang diidentifikasi sebagai pro-otonomi, walaupun keterlibatan para korban dalam kekerasan sebelumnya tidak selalu jelas.⁸⁶⁷ Seorang deponen memberikan deskripsi berikut ini mengenai insiden semacam itu di Lautém:

Tanggal 8 Oktober 1999, pasukan Falintil pimpinan M233 melakukan penghadangan terhadap beberapa orang anggota Tim Alpha di tempat bernama Warusira, Tenu, kecamatan Moro [sekarang kecamatan Lautém]...Dalam kejadian tersebut Mario João Lopes bersama teman-temannya terbunuh oleh pasukan Falintil...karena mereka dicurigai sebagai pembunuh para suster...Informasi pembunuhan ini disampaikan oleh komandan Falintil M233 kepada saya, setelah pembunuhan itu.⁸⁶⁸

756. Secara keseluruhan, Komisi telah menerima informasi tentang 22 eksekusi di luar hukum dan tujuh penghilangan yang dilakukan oleh Falintil pada 1999, 17 di antaranya terjadi pada periode setelah referendum.

Tabel 48: Warga sipil dan Hansip yang dibunuh oleh Fretilin/Falintil, 1990-1999, yang dilaporkan pada CAVR

| Lokasi | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999* |
|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Lautém | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | - | 1 |
| Viqueque | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 2 | - |
| Baucau | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 5 |
| Manatuto | - (1) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Manufahi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ainaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Angka untuk 1999 termasuk tujuh individu yang diduga dihilangkan oleh Falintil: dua individu di Baucau pada April dan satu pada Juni, serta empat individu di Ermera pada September.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aileu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ermera | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 3 | 5 | 10 |
| Covalima | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Bobonaro | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 9 |
| Liquiça | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 |
| Dili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 (1) | - | 4 | - | 3 | 2 | 22 | 15 | 17 | 29 |

Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, 1999

757. Komisi memperkirakan bahwa pada 1999 TNI dan milisi bertanggungjawab atas pembunuhan di luar hukum terhadap 1.400 hingga 1.500 penduduk sipil.* Komisi telah menerima berbagai pernyataan yang melaporkan terjadinya pembunuhan di luar hukum terhadap 785 orang oleh TNI atau milisi di Timor Leste antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999. Dua puluh tujuh orang lainnya, seperti yang dilaporkan kepada Komisi, telah dibunuh di kamp-kamp pengungsi di Timor Barat. † Bobonaro, Covalima, dan Oecussi adalah tiga distrik yang melaporkan jumlah pembunuhan dan penghilangan tertinggi.

758. Seluruh laporan dan pernyataan menunjukkan bahwa jumlah pembunuhan dan penghilangan di Distrik Bobonaro adalah yang tertinggi pada 1999. Berbagai pernyataan yang diterima Komisi menyebutkan kematian 141 penduduk sipil akibat pembunuhan dan penghilangan yang terjadi di distrik tersebut. ‡ Setidaknya terdapat sembilan kelompok milisi di Bobonaro pada 1999 dan di masing-masing dari enam subdistriknya terdapat setidaknya satu kelompok milisi. Kelompok milisi agresif yang pertama ada di distrik tersebut adalah Halilintar, yang dipimpin oleh Panglima PPI (Pasukan Pejuang Integrasi), João Tavares (lihat Tabel Milisi di Bagian 4: Rezim pendudukan). Basis utama Halilintar berada di Maliana dan Atabae dan beroperasi di seluruh distrik tersebut, bahkan hingga ke luar wilayah. Di antara kelompok-kelompok milisi yang terbesar, Dadurus Merah Putih (Maliana), Firmi Merah Putih (Balibó), Saka Loromonu (Balibó), dan Hametin Merah Putih

* Perkiraan 1400 ini dikutip, antara lain, oleh laporan perkembangan terkini oleh Sekretaris Jenderal kepada Dewan Keamanan mengenai UNMISSET, 18 Februari 2005. S/2005/99. Dakwaan yang diajukan oleh Unit Kejahatan Berat di Timor-Leste mencakup 572 dari 1,400 pembunuhan yang diperkirakan.

† Sebuah studi yang dimandatkan oleh Kantor Tinggi Komisaris Hak Asasi Manusia PBB (Office of the High Commissioner for Human Rights, atau OHCHR), dan kemudian diserahkan kepada Komisi, memperkirakan bahwa jumlah pembunuhan yang dilakukan pada 1999 ada di antara 1.200 dan 1.500. (Geoffrey Robinson, *East Timor 1999 – Crimes against Humanity*, Laporan oleh Kantor Tinggi Komisaris Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), July 2003, Submisi kepada CAVR, April 2004, p. 1 Berikut disebut sebagai submisi OHCHR).

‡ Submisi OHCHR memperkirakan bahwa ada 229 kasus pembunuhan di Bobonaro (submisi OHCHR, h.142)

(Bobonaro) merupakan yang paling aktif. Hubungan antara TNI dengan kelompok-kelompok milisi di distrik tersebut sangat erat. Komandan Kodim, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, merupakan pendukung kuat kelompok-kelompok milisi. Selain perwira tersebut, Letnan Sutrisno, Kepala Intelijen Kodim Maliana, merupakan perwira TNI yang sangat berperan dalam mengorganisasi kelompok-kelompok milisi tersebut dan mengoordinasi berbagai aktivitas mereka.

759. Kondisi di Distrik Covalima hampir sama buruknya dengan di Bobonaro. Jumlah pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi adalah 131.* Kelompok milisi terbesar di distrik tersebut, Laksaur, setidaknya mulai aktif sejak Januari 1999 di daerah-daerah bagian tengah dan barat, sementara subdistrik bagian timur seperti Mape/Zumalai sebagian besar dikuasai oleh kelompok milisi Mahidi dari distrik tetangga, Ainaro. Kelompok milisi Laksaur, dipimpin oleh Olivio Mendonça Moruk, mendapatkan dukungan kuat dari para penguasa militer dan sipil setempat, termasuk Komandan Kodim, Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus (yang pada akhir Agustus digantikan oleh Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto) dan Bupati, Kolonel Herman Sedyono.

760. Distrik Oecussi melaporkan 125 kasus pembunuhan dan penghilangan kepada Komisi.† Sebagian besar pembunuhan yang dilaporkan tersebut terjadi pada masa pasca Jajak Pendapat. Kepergian staf PBB dan para pengamat internasional yang dini, ketiadaan kelompok-kelompok prokemerdekaan bersenjata, dan keterlambatan Interfet untuk datang, memberikan TNI dan kelompok-kelompok milisi kebebasan untuk menciptakan kehancuran dan kekacauan selama dua bulan setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat. Kedekatan geografis dengan wilayah Indonesia juga menyediakan tempat yang aman untuk menyiapkan berbagai operasi. Kelompok milisi di Oecussi, Sakunar, dipimpin oleh Simão Lopes. Simao Lopes adalah mantan Camat di Passabe dan Oesilo pada 1980-an, dan pada 1999 bekerja sebagai Dinas Perikanan di Kantor Kabupaten Oecussi. Sakunar mendapat dukungan penuh dari para penguasa militer dan sipil tertinggi di distrik tersebut, antara lain dari Bupati, Filomeno Mesquita da Costa, Kepala Polisi Resort (Kapolres), Letnan Kolonel Polisi Wilmar Marpaung, dan Komandan Kodim, Letnan Kolonel Kamiso Miran dan Letnan Kolonel Bambang Sungesti, yang menggantikan Letnan Kolonel Miran pada awal Agustus 1999.

761. Berdasarkan berbagai kesaksian yang diterima oleh Komisi, pembunuhan di luar hukum terjadi jauh lebih banyak di distrik-distrik bagian barat, yang lebih dekat dengan perbatasan dengan Indonesia dan tempat basis milisi yang terkenal lebih kejam, dibanding dengan distrik-distrik bagian timur. Selain dari ketiga distrik yang disebut di atas, Dili dan Liquiça juga mencatat jumlah pembunuhan dan penghilangan yang cukup tinggi pada 1999. Dua distrik lain dengan jumlah korban relatif tinggi adalah Ermera dan Lautém. Viqueque dan Aileu merupakan distrik

* Submisi OHCHR melaporkan bahwa paling tidak terjadi 190 pembunuhan di Distrik Covalima (submisi OHCHR, h. 149).

† Submisi OHCHR memperkirakan bahwa setidaknya telah terjadi 170 kasus di Oecussi (submisi OHCHR, h.184)

dengan jumlah kejadian terendah. Salah satu faktor utama yang menentukan skala terjadinya pembunuhan adalah kekuatan kelompok milisi di masing-masing distrik. Kelompok-kelompok milisi yang terkenal kejam seperti Dadurus Merah Putih, Laksaur, Aitarak, Tim Pancasila, Mahidi, Besi Merah Putih, dan Sakunar berbasis di distrik-distrik yang memiliki tingkat kekerasan fatal tertinggi. Sementara itu, Aku Hidup untuk Integrasi di Aileu dan Tim Makikit di Viqueque tidak seagresif dibandingkan dengan kelompok-kelompok milisi yang lain.

762. Pembunuhan di luar hukum biasanya dilaksanakan oleh bermacam-macam pelaku dengan menggunakan beragam persenjataan mulai dari golok, senjata rakitan, hingga senjata otomatis. Para korban sering dijadikan sasaran secara perorangan karena afiliasi prokemerdekaan mereka. Yang teramat rentan dijadikan sasaran adalah para pelajar dan mahasiswa, orang-orang yang secara terang-terangan ikut dalam berbagai kegiatan kampanye CNRT, dan para staf UNAMET orang Timor-Leste. Kekerasan tidak hanya ditujukan kepada para korban secara langsung tetapi juga dengan mengintimidasi anggota komunitas yang lain. Tampaknya karena alasan inilah para korban sering kali dimutilasi sebelum atau sesudah mereka dibunuh.

763. Terdapat tanda-tanda yang jelas bahwa TNI telah bekerjasama dengan kelompok-kelompok milisi dalam berbagai pembunuhan yang terjadi. Kerjasama terjadi di semua tingkatan termasuk mendanai, melatih, mengarahkan, atau bahkan memerintahkan milisi-milisi tersebut di lokasi penyerangan. Dalam beberapa kasus para anggota TNI terlibat secara langsung dalam pembunuhan terhadap penduduk sipil. Sebagai suatu pola umum, para anggota TNI lebih terlibat langsung dalam kekerasan di mana kelompok milisi setempat masih lemah. Hal ini terutama terlihat pada awal-awal 1999. Jika anggota TNI tidak terlibat secara langsung, mereka sering ada di tempat kejadian namun tidak melakukan apapun untuk mencegah milisi melakukan kekejaman, dan secara diam-diam mengizinkan dan membiarkan terjadinya kekerasan tersebut. Beberapa pemimpin milisi, termasuk Joanico Belo, komandan kelompok milisi Saka di Baucau, dan Cesario Tilman, anggota kelompok milisi Mahidi di Ainaro, sebenarnya adalah para anggota TNI. Penguasa sipil seperti bupati, camat, atau kepala desa sering kali juga terlibat dalam mendukung atau melaksanakan berbagai kegiatan milisi.* Sejumlah pemimpin sipil lokal juga merupakan anggota kelompok-kelompok milisi setempat.

764. Para korban pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh TNI dan milisi sebagian besar merupakan pendukung atau yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan. Banyak dari mereka adalah pendukung kemerdekaan yang terkenal termasuk para anggota CNRT, klandestin, pendukung Falintil, para pelajar aktivis, dan kerabat mereka. Terkadang dibuat sebuah daftar orang-orang yang akan dibunuh. Para pemimpin setempat yang terlihat simpatik terhadap perjuangan

* Sambungan antara militer Indonesia, para penguasa sipil, dan milisi dapat dilihat secara terang di kasus individu-individu, seperti kasus Vidal Doutel Sarmiento, yang bertindak sebagai Bupati Manatuto, anggota Kopassus, pendiri milisi Mahadomi, dan penasihat kepada kelompok milisi tersebut. Olivio Mendonça Moruk, seorang bupati dan komandan militer di Covalima, bertindak pula sebagai pemimpin milisi Laksaur. Milisi AHI di Aileu didirikan dan didukung oleh administrasi distrik sipil.

kemerdekaan, dan para rohaniwan Katolik seperti para pastor, biarawati, dan biarawan kadang-kadang juga menjadi sasaran. Para korban termasuk rakyat biasa yang mencoba untuk melarikan diri dari TNI dan milisi karena takut, dan penduduk desa yang mengungsi ke gunung-gunung setelah Jajak Pendapat, yang dengan demikian tidak mematuhi perintah untuk pergi ke Timor Barat (lihat Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan dan penganiayaan; pada seksi mengenai pengungsian sebelum dan sesudah Jajak Pendapat, 1999). Karena berbagai tindakan itu orang-orang tersebut dicurigai memihak kepada prokemerdekaan. Dalam suatu pola yang sangat sewenang-wenang, TNI dan milisi juga menyerang desa-desa yang dicurigai prokemerdekaan dengan membakar rumah-rumah dan membunuh para penduduk sipil. Banyak pembunuhan secara acak juga dilakukan, khususnya setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat oleh tentara Batalion 745 pada akhir September ketika dalam perjalanan menarik diri dari Lospalos ke Dili.

765. Kekerasan yang terjadi pada 1999, termasuk pembunuhan dan penghilangan, terjadi dalam tiga fase yang berbeda, masing-masing dengan pola pelanggaran sendiri. Fase pertama mencakup Januari – Mei; fase kedua mencakup Juni – 29 Agustus, dan fase ketiga mencakup masa setelah hari Jajak Pendapat, 30 Agustus sampai akhir Oktober, ketika Interfet berhasil mengambil kendali atas seluruh wilayah Timor-Leste. * Sebagian besar pembunuhan di luar hukum yang terjadi pada masa-masa sebelum kedatangan UNAMET dan setelah Jajak Pendapat, memperlihatkan bahwa berbagai pembunuhan yang terjadi mungkin terkait erat dengan kehadiran atau ketidakhadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa serta penyelidikan internasional terhadap perilaku TNI.

Januari sampai akhir Mei

766. Milisi, sering dalam kerjasama dengan ABRI/TNI, melakukan banyak sekali kejahatan serius termasuk pembunuhan massal dan penghilangan yang terjadi sebelum UNAMET memulai operasinya di Timor Leste. Ini merupakan periode saat bentuk khas kelompok-kelompok milisi mulai terwujud dengan melakukan perekrutan, pelatihan, pelantikan, dan konsolidasi dalam suatu struktur yang lengkap. Selama masa ini milisi menjadikan sasaran orang-orang yang dianggap memihak pada prokemerdekaan. Berbagai kesaksian yang diterima oleh Komisi menunjukkan bahwa, antara Januari dan akhir Mei 1999, lebih daripada 250 orang dibunuh atau hilang di luar hukum. Kejadian ini dimulai kemudian memuncak pada April sebelum menurun pada Mei. Ini termasuk beberapa serangan terhadap tempat-tempat penampungan untuk para pengungsi internal, yang terjadi ketika negosiasi-negosiasi yang nantinya menghasilkan Kesepakatan 5 Mei, yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal dengan dukungan PBB, sedang dalam fase akhir.

.....
* Geoffrey Robinson membahas tiga fase tersebut sebagai periode pra-UNAMET, periode UNAMET, dan periode jajak-pendapat (hal-hal. 44-47, *East Timor 1999 - Crimes Against Humanity*, Laporan oleh Kantor Tinggi Komisaris Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), Los Angeles, UCLA, Juli 2003, Submisi kepada CAVR, April 2004)

Awal Juni sampai 30 Agustus

767. Jumlah orang yang dibunuh dalam tindak-tanduk kekerasan politik menurun drastis ketika UNAMET, para pengamat internasional, dan para wartawan mulai berdatangan di wilayah ini sejak awal Juni. Eksekusi-eksekusi pada periode ini bentuknya juga berbeda. Pembunuhan terutama dilakukan oleh milisi Timor-Leste, terkadang dengan bantuan personel TNI berpakaian sipil. Militer Indonesia tampaknya mencoba menutup-nutupi keterlibatan langsungnya dalam eksekusi dan berbagai pelanggaran lain sepanjang masa ini. Namun demikian, pada akhir Agustus bertepatan dengan masa kampanye yang sudah ditentukan, terjadi peningkatan drastis segala bentuk pelanggaran, termasuk pembunuhan. Para pelajar dan mahasiswa serta para anggota CNRT yang ikut serta dalam kegiatan kampanye menjadi sasaran utama pembunuhan tersebut. Selama periode ini lebih daripada 30 kasus pembunuhan dan penghilangan telah dilaporkan kepada Komisi.

30 Agustus sampai akhir Oktober

768. Periode yang relatif tenang berakhir secara dramatis tak lama setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, ketika milisi dan TNI membunuh staf lokal UNAMET pada 30 Agustus dan 2 September. Namun demikian, di sebagian besar wilayah ini kekerasan mulai meluas pada 4 September, pada hari ketika hasil Jajak Pendapat diumumkan secara resmi. Pengumuman dilakukan pada pagi hari, dan pada siang harinya milisi, para prajurit TNI, dan polisi turun ke jalan di kota-kota dan desa-desa di seluruh wilayah, menembakkan senjata-senjata mereka, menyerang para pendukung kemerdekaan, dan membakari rumah-rumah serta gedung-gedung pemerintah. Secara resmi TNI mengambil alih tanggung jawab untuk hukum dan ketertiban dari polisi pada 4 September dan pada 6 September Presiden Habibie menetapkan darurat militer di Timor-Leste. Walaupun ada langkah-langkah seperti ini yang konon dilakukan untuk memulihkan ketertiban, jumlah pembunuhan dan penghilangan meningkat tajam selama periode ini, dengan lebih dari 560 kejadian. Jumlah pembunuhan yang dilaporkan kepada Komisi yang terjadi dalam periode yang relatif singkat ini adalah 528, sejauh ini merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan tiga periode lainnya yang dijelaskan di atas.

Tabel 49: Pembunuhan dan penghilangan terhadap warga sipil oleh milisi dan TNI, 1999, yang dilaporkan kepada CAVR

| Lokasi | Jan. - Mei | | Jun. - Agu. | | Sep. -Okt. | | Total pelanggaran terlapor fatal |
|----------|------------|--------|-------------|--------|------------|--------|----------------------------------|
| | Dibunuh | Hilang | Dibunuh | Hilang | Dibunuh | Hilang | |
| Lautém | 4 | - | 1 | - | 41 | - | 46 |
| Viqueque | 4 | - | 3 | - | 4 | - | 11 |
| Baucau | 3 | 3 | - | - | 13 | - | 19 |
| Manatuto | 5 | 1 | - | - | 19 | - | 25 |
| Manufahi | 8 | 1 | - | - | 13 | - | 22 |

| | | | | | | | |
|--|----|------------|---|-----------|-----|------------|------------|
| Ainaro | 5 | - | - | - | 29 | - | 34 |
| Aileu | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| Ermera | 30 | - | 2 | 1 | 12 | - | 45 |
| Covalima | 22 | 10 | 1 | - | 98 | - | 131 |
| Bobonaro | 52 | - | 9 | - | 81 | - | 142 |
| Liquiça | 50 | - | 3 | - | 6 | - | 61 |
| Dili | 24 | - | 6 | - | 52 | - | 82 |
| Oecusse | 1 | - | 4 | 1 | 118 | - | 125 |
| Timor Barat | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
| Sub-Total (termasuk pembunuhan dan penghilangan) | | 223 | | 34 | | 528 | 785 |

Januari–Mei: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan sebelum kedatangan UNAMET

769. Sebelum Juni, pembunuhan di luar hukum cukup umum dilakukan oleh TNI bersama kelompok-kelompok milisi. Kerjasama terang-terangan antara TNI dan milisi ini sangat kontras dengan periode di luar hukum UNAMET hadir, dan militer Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menutup-nutupi peranannya dalam kekerasan yang terjadi. Komisi menerima laporan mengenai pembunuhan dan penghilangan yang terjadi sepanjang lima bulan pertama tahun 1999 di 12 dari 13 distrik di Timor Timur, pengecualiannya adalah Aileu.

770. Jumlah kejadian pembunuhan dan penghilangan tertinggi yang dilapor kepada Komisi terjadi dalam Januari sampai Mei, di Bobonaro dan Covalima, masing-masing berjumlah 52 dan 50 kejadian. Sebagian besar kasus dari Bobonaro yang dilaporkan kepada Komisi merupakan bukti eratnya kerja sama antara TNI dan kelompok-kelompok milisi. Tabel-tabel berikut ini merangkum semua kasus tersebut, kecuali berbagai kasus yang terjadi pada April 1999 yang dibahas secara terpisah di bawah ini.

Tabel 50: Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh TNI dan kelompok-kelompok milisi secara bersama-sama, Januari-Maret, Mei 1999, Distrik Bobonaro

| Pernyataan HRVD | Ringkasan |
|-----------------|--|
| 1122 | Pada 4 Januari anggota SGI dan milisi Halilintar, dipimpin oleh M295, membunuh seorang pendukung Fretilin, Valentino Guilhermino, di Aipusra, Atabae (Atabae). |
| 1828 | Pada 27 Januari, anggota SGI dan milisi Halilintar menyerang Abel Martins di rumahnya di Faturasen, Rairobo (Atabae). Dia ditembak mati ⁸⁶⁹ |

| | |
|------------|--|
| 2485 | Pada 16 Maret milisi BMP bersama dengan anggota TNI dari Koramil Atabae, memeriksa orang-orang yang dalam perjalanan di Sukaer Laran, Atabae. Mereka menangkap Armindo Bento, seorang penumpang bus tujuan Dili, karena kartu identitasnya telah habis masa berlakunya. Bento dilaporkan disiksa habis-habisan dan kemudian dibunuh. |
| 2418, 2585 | Pada 19 Maret, para anggota TNI bersama milisi Halilintar menyerang sebuah pertemuan para anggota klandestin di Ritabou (Maliana). Pernyataan para saksi menyebutkan hadirnya Komandan Halilintar M295, M56, dan salah satu anggota TNI, M57 [seorang dari Timor Leste]. Pedro dos Santos, Domingos dos Santos, José Barros dan Fonseca Asu Mau semua ditembak mati dalam penyerangan tersebut. Para peserta lain dalam pertemuan tersebut melarikan diri. |
| 8630 | Seorang pemimpin CNRT, Bonifacio Barreto, diculik oleh para anggota Kodim Maliana, SGI dan milisi Saka Loromonu pada Mei. Dia dibawa ke pantai di Batugade, di mana dia dilaporkan dibunuh dan tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah tas dan dibuang. ⁸⁷⁰ |
| 2551 | Pada 7 Mei, milisi Halilintar, dipimpin oleh M295, membunuh Augusto Soares di Bea Horo, Ritabou. Pada 17 Mei, Longuinos Batu Mali dilaporkan ditikam hingga mati di Sungai Bulobu di Ritabou, oleh para anggota Dadurus Merah Putih bersama para anggota Kodim Maliana. |

Tabel 51: Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi secara bersama-sama, Januari-Maret, Mei 1999, Distrik Bobonaro

| Pernyataan HRVD | Ringkasan |
|------------------|---|
| 1135, 1786, 1159 | Milisi Halilintar, dipimpin oleh M295, dilaporkan membunuh Luciano dari Hauba (Maliana) pada 17 Mei dan Petrus Santos pada 19 Mei dan terlibat dalam penghilangan terhadap Eugenio da Silva Gonçalves, seorang pelajar SMA dari Maliana, pada 29 Mei. |
| 6683 | Milisi Hametin Merah Putih dilaporkan membunuh Domingos Lole Mau di Edeoa, Desa Kota Boot (Bobonaro, Bobonaro) pada 9 Mei. |
| 8227 | Pada 11 Mei, milisi Dadurus Merah Putih, termasuk M58, membunuh Pedro de Jesus di Holgaul, Desa Leber (Bobonaro, Bobonaro). |
| 8241-03 | Pada 17 Mei, para anggota Dadurus Merah Putih menangkap Fernando Correia di sebuah gereja di Bobonaro, membawanya ke pos DMP di Bobonaro, dan kemudian ke aldeia Manu Aman, Tunu Bibi (Maliana) di mana dia dilaporkan dibunuh. |

771. Sepanjang periode ini dua kelompok milisi, Mahidi dan Laksaur, aktif di subdistrik di Distrik Covalima. Komisi menerima kesaksian mengenai sebuah pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Desa Oebaba, Mape (Zumalai, Covalima) oleh seorang prajurit TNI dan tiga orang anggota Mahidi. Menurut kesaksian yang diberikan oleh João da Costa Fernandes Cardoso, pada 24 Januari Fernando Cardoso dipukul oleh prajurit dan dua dari anggota Mahidi tersebut, kemudian dia ditembak mati oleh anggota Mahidi yang ketiga, yang mencuri motornya serta uang sebesar Rp800.000,00.⁸⁷¹

772. Tabel berikut ini merangkum semua kasus yang telah dilaporkan kepada Komisi mengenai pembunuhan dan penghilangan yang terjadi di Distrik Covalima antara Januari-Mei 1999, kecuali untuk berbagai peristiwa pada April 1999 yang dilaporkan secara terpisah di bawah ini.

Tabel 52: Pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi, Januari-Maret, Mei 1999, Distrik Covalima*

| Pernyataan HRVD dan Perkara SCU | Ringkasan |
|-----------------------------------|--|
| 3684; dan perkara SCU no. 2003/06 | Milisi Halilintar, dipimpin oleh M295, dilaporkan membunuh Luciano dari Hauba (Maliana) pada 17 Mei dan Petrus Santos pada 19 Mei dan terlibat dalam penghilangan terhadap Eugenio da Silva Gonçalves, seorang pelajar SMA dari Maliana, pada 29 Mei. |
| 8446-02 | Milisi Hametin Merah Putih dilaporkan membunuh Domingos Lole Mau di Edeoa, Desa Kota Boot (Bobonaro, Bobonaro) pada 9 Mei. |
| 5117 | Pada 11 Mei, milisi Dadurus Merah Putih, termasuk M58, membunuh Pedro de Jesus di Holgaul, Desa Leber (Bobonaro, Bobonaro). |
| 5163 | Pada 17 Mei, para anggota Dadurus Merah Putih menangkap Fernando Correia di sebuah gereja di Bobonaro, membawanya ke pos DMP di Bobonaro, dan kemudian ke aldeia Manu Aman, Tunu Bibi (Maliana) di mana dia dilaporkan dibunuh. |
| 5115 | Seorang komandan Gadapaksi menceritakan kepada seorang deponen bahwa anakbuahnya membunuh seseorang bernama Ernesto dos Santos. Korban dilaporkan diculik di Salele (Tilomar) pada 15 Maret dalam perjalanan ke Dili untuk menjenguk istrinya yang sakit. |
| Perkara SCU No. 2003/14 | Pada atau sekitar 13 Mei, José Afonso Amaral dibunuh oleh milisi Laksaur di Foloro (Fatululik) ketika dia bersama beberapa orang lainnya mencoba mencegah kelompok milisi membawa saudara laki-lakinya untuk dibunuh. ⁸⁷² |
| Perkara SCU No. 2003/14 | Pada 28 Mei, milisi Laksaur di bawah komando Egidio Manek menyerang sebuah gubuk di Hutan Weisei dekat Oegues (Maucatar, Suai Kota), tempat persembunyian Domingos Martins dan Gabriel Amaral. Kedua pendukung kemerdekaan itu dibunuh. ⁸⁷³ |
| Perkara SCU No. 2003/14 | Pada atau sekitar 28 Mei, seorang anggota gerakan klandestin, Vasco Amaral, diculik di Fatumean oleh sekelompok milisi Laksaur, di bawah komando Henrikus Mali. Henrikus Mali memerintahkan penduduk desa untuk tidak mencari Vasco Amaral karena "Vasco Amaral tidak ada lagi". Tubuhnya ditemukan pada atau sekitar 30 Mei. ⁸⁷⁴ |

Peningkatan kekerasan terkoordinasi pada April 1999: pembunuhan-pembunuhan di Liquiça, Cailaco, dan Dili.

773. Komisi telah menerima bukti yang menunjukkan kekerasan terkoordinasi di seluruh Timor-Leste yang terjadi pada April 1999, bulan sebelum penandatanganan Kesepakatan 5 Mei. Pada April 1999, tiga kejadian pelanggaran besar terhadap hak-hak asasi manusia terjadi di Liquiça, Bobonaro, dan Dili.

774. Pembantaian pertama pada 1999 terjadi di Gereja Liquiça pada 6 April. Kejadian ini, di mana setidaknya 60 orang yang sedang mengungsi di gereja tersebut dibunuh,⁸⁷⁵ dapat menggambarkan sifat kekerasan yang terorganisasi yang dilakukan oleh TNI/milisi. Sebelum kejadian ini, pada April, TNI dan milisi Besi

* Pembunuhan dan penghilangan yang terjadi pada April 1999 dilaporkan dalam bagian berikut ini

Merah Putih (BMP) mengencarkan kampanye kekerasan mereka terhadap para aktivis prokemerdekaan dan penduduk sipil di Liquiça. Pada 5 April, dalam tiga kejadian terpisah, tiga orang pendukung kemerdekaan, Herminio dos Santos, Ilidio dos Santos, dan Laurindo da Costa Gonçalves, diculik oleh anggota BMP.⁸⁷⁶

775. Menanggapi memburuknya kondisi keamanan, penduduk dari subdistrik di Liquiça dan Maubara mulai mengungsi ke Gereja Katolik di Liquiça kota (Liquiça, Liquiça). Setidaknya 2.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, berada di kompleks gereja itu pada 6 April. Dini hari pada 6 April milisi BMP bersama beberapa pasukan TNI, termasuk pasukan dari Kodim di Liquiça, Koramil di Maubara, dan juga Brimob dari Dili, para anggota Kopassus, Batalion 143, dan polisi setempat tiba di gereja itu. Dua petugas kepolisian meminta agar Pastor Rafael dos Santos menyerahkan Jacinto da Costa Pereira, Kepala Desa Dato (Liquiça, Liquiça) bersama seorang laki-laki lain, keduanya dikenal sebagai pemimpin prokemerdekaan.

776. Komisi telah menerima banyak sekali pernyataan mengenai pembantaian yang terjadi di Gereja Liquiça.⁸⁷⁷ Menurut seorang saksi, antara pukul 12.00 dan 3.00, para anggota Brimob melepaskan tembakan ke udara dan kemudian para anggota milisi memasuki pekarangan gereja.⁸⁷⁸ Gas airmata dilemparkan ke dalam kediaman pastor, memaksa orang berhamburan keluar. Ketika mereka berlari menyelamatkan diri, mereka diserang secara brutal oleh TNI dan para anggota milisi yang sudah menunggu di luar. Berdasarkan cerita Pastor Rafael, para penyerang membunuh para laki-laki tetapi membiarkan perempuan dan anak-anak meninggalkan tempat tersebut.⁸⁷⁹ Kemudian mereka memasuki kediaman pastor itu dan membunuh siapa saja yang mereka temui di dalam. Komandan BMP, M61, terlihat berada di dalam pekarangan gereja itu bersama dengan anakbuahnya. Ketika sebagian besar pengungsi telah meninggalkan gereja dan kediaman pastor, para anggota BMP, polisi, dan tentara, termasuk Sersan M62 [seorang Timor], datang untuk mencari orang-orang yang tersisa. Siapa pun yang mereka temukan dibunuh.⁸⁸⁰ Beberapa orang melarikan diri ke rumah Bupati, Leoneto Martins, di mana milisi dan tentara yang mengejar membunuh atau mencederai mereka dengan parah.

777. Sulit untuk memperkirakan jumlah persis korban karena mayat-mayat mereka dibawa pergi.⁸⁸¹ Sementara laporan resmi polisi (Polda) mengatakan bahwa hanya lima orang yang tewas dalam penyerangan tersebut dan peristiwa terkait setelahnya, laporan lain memperkirakan jumlahnya antara 30 sampai lebih daripada 100.⁸⁸² Setelah pembantaian di Gereja Liquiça banyak orang yang melarikan diri ke Dili dan mengungsi di rumah Manuel Carrascalão. Mereka kemudian diserang lagi pada 17 April oleh milisi BMP dan Aitarak.

778. Pembunuhan terhadap para pendukung kemerdekaan atau orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan di Liquiça terus berlanjut setelah pembantaian di Gereja Liquiça.⁸⁸³ Pada 7 April, Fernando da Costa diduga ditikam sampai mati di Koramil Liquiça oleh anggota milisi.⁸⁸⁴ Pada 9 April atas perintah M65 [seorang Timor], seorang Komandan BMP untuk Bazartete dan Liquiça, seorang laki-laki bernama Carlos diduga ditangkap, dibawa ke pantai di Pala yang berdekatan dengan permakaman militer Indonesia dan kemudian dibunuh. Dia

membawa sejumlah dokumen terkait kegiatan CNRT di dalam kantong pakaiannya. Pada 14 April, Henrique Borges, Carlos dos Santos da Costa, dan Leo Lakon dibunuh di pantai di Pilila, Leohata (Liquiça, Liquiça) oleh anggota TNI, M302.⁸⁸⁵ Pada 21 April, Felix Barreto dibunuh oleh para anggota milisi BMP di Ulmera (Bazartete, Liquiça).⁸⁸⁶ Pada atau sekitar 27 April, Tobias Alves Correia dan Elias Ataidi dibunuh oleh milisi di Tutuge, Loidahar (Liquiça, Liquiça) karena dikenal sebagai pendukung prokemerdekaan. Diduga nama-nama mereka ada dalam sebuah daftar yang dibuat oleh anggota TNI Sersan M62 [dari Timor] dan yang lainnya.⁸⁸⁷ Pada 26 April di Maubara, seorang laki-laki bernama Abel ditangkap dan dibawa ke danau untuk dibunuh. Abel tidak pernah terlihat lagi sejak itu.⁸⁸⁸

Seorang korban yang selamat dari pembantaian di Gereja Liquiça⁸⁸⁹

Pada pagi hari 5 April 1999, saya sedang berjalan kaki dari kantor Sospol di Liquiça ke rumah saya ketika saya bertemu dengan teman saya Lukas dari Flores, Indonesia. Dia mendorong saya untuk cepat pulang ke rumah dengan mengatakan, "Saya mendengar bahwa milisi Besi Merah Putih kini sudah berada di perbatasan Liquiça dan Maubara." Saya memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Sebagai gantinya, saya datang ke sebuah pertemuan mengenai peringatan Paskah untuk muda-mudi di Manatuto. Saya bertemu dengan teman-teman saya, Jacinta, Suzi, dan Ermelita. Kami tidak yakin apakah baik kalau kami berpartisipasi dalam peringatan itu; maka kami pun mendatangi Padre Rafael untuk menanyakan pendapatnya mengenai hal ini. Saat sedang bertemu dengan Padre Rafael, Kepala Desa Jacinto da Costa, datang dan memberitahu kami bahwa seorang pemuda telah dibunuh dan yang lainnya luka-luka dalam sebuah serangan oleh milisi dan militer.

Menjelang sore kami meninggalkan kediaman Pastor Rafael. Ketika sampai di rumah, saya langsung mendatangi Aquilina untuk mendapatkan informasi lebih jauh. Aquilina tinggal di dekat papan tanda "Selamat Datang" di Liquiça. Begitu sampai di rumahnya, saya mendengar suara-suara tembakan yang datang dari arah Pukalaran. Saya langsung pulang ke rumah dan mendapati bahwa keluarga saya telah lari ke gereja di Liquiça. Lalu saya bergabung dengan mereka di sana. Banyak orang yang bersembunyi di gereja itu, termasuk orang-orang dari Desa Dotasi, Guilu, Leopa, Caimeo Atas, dan Caimeo Bawah. Pada sore hari, milisi dan militer menjarah dan membakar rumah Camat João Bosco dan Agustinho. Selama dua hari kami tinggal di dalam gereja itu, kami tidak bisa buat apa-apa, melainkan terus-menerus berdoa. Kami tidak bisa tidur pada malam hari, dan di luar gereja para milisi terus mengganggu kami dengan ancaman dan kata-kata kotor.

Pada pukul 9 pagi, pada 6 April, Eurico Guterres dan anak buahnya datang ke kantor gereja di Liquiça untuk berbicara dengan Padre Rafael dan Padre José. Kami mendengar bahwa, selama pertemuan itu Eurico Guterres mengatakan bahwa dia akan mengajukan sebuah permintaan kepada Bupati Leoneto Martins. Eurico mengatakan bahwa jika Leoneto memenuhi tuntutan milisi, maka milisi akan membiarkan para warga untuk pulang ke rumah dengan aman. Tetapi pertemuan Eurico dengan Leoneto tidak menghasilkan jaminan itu.

Pada awalnya, Brimob tiba seolah untuk menyelamatkan orang-orang. Kenyataannya, Brimoblah yang justru memulai tembakan. Sekitar jam satu siang, Milisi Besi Merah Putih bersama polisi dan militer menyerang gereja. Kemudian mereka melepaskan tembakan ke udara guna memberikan sinyal kepada milisi untuk memasuki gereja, dan kemudian mereka mulai menembaki orang-orang. Dengan mengenakan topeng yang menutupi wajah mereka, milisi dan militer kemudian menyerang dengan kapak, pedang, pisau, bom, dan senjata api. Polisi menembak kakak lelaki saya, Felix, dan milisi membacok saudara-saudara sepupu saya, Domingos, Emilio, serta seorang bayi berusia 8 bulan.

Karena Brimob dan militer membantai orang-orang yang bersembunyi di kantor pastor, maka semua orang kini mulai berlarian keluar gereja, berusaha menemukan tempat untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri. Saya pergi bersama istri Emilio, dan kami bergerak menuju Kesusteran. Saat pergi, kami melihat Miguel masih hidup, tetapi Loidahar dan seorang lainnya dari Maubara tergeletak mati di dekat lonceng gereja.

Milisi, polisi, dan militer telah mempersiapkan sebuah truk untuk mengangkut orang-orang ke rumah bupati. Ketika kami tiba, milisi melanjutkan aksinya dan terus memukuli serta menikam warga sipil. Beberapa orang tewas di rumah bupati. Untunglah ada seorang perawat yang merawat orang-orang yang terluka. Setelah sekitar tiga jam, Agustinho, seorang pegawai negeri, di Maubara mengumumkan kepada masyarakat dengan mengatakan, “Pulanglah ke rumah kalian dan naikkanlah bendera Indonesia. Dan ikatkanlah bendera Indonesia ke tangan kanan kalian untuk menunjukkan bahwa kita siap mati demi bendera ini.”

Seminggu setelah pembantaian itu, seorang wakil militer dari Sektor Timur, bernama Pedro, berbicara tentang kekerasan yang dilakukan oleh militer dan milisi terhadap kami pada hari itu. Dia mengatakan bahwa militer dari Kodim juga terlibat. Saya mendengar bahwa mayat orang-orang yang tewas diangkut dalam sebuah truk, tapi saya tidak tahu ke mana mereka dibawa.

779. Peristiwa besar kedua pada April 1999 terjadi di Subdistrik Cailaco (Bobonaro). Pada 12 April, anggota TNI dan milisi Halilintar mengeksekusi setidaknya tujuh orang.* Ini merupakan pembalasan atas pembunuhan terhadap setidaknya satu orang prajurit TNI dan seorang tokoh pro-otonomi setempat, Manuel Gama, dalam serangan mendadak yang terjadi di dekat Desa Porogoa sebelumnya pada hari yang sama.† Setelah kematian Manuel Gama, para tentara dan milisi mencari para tersangka. Komisi menerima setidaknya satu laporan tentang percobaan pembunuhan pada saat awal penyisiran ini.⁸⁹⁰ Sebuah kelompok yang terdiri atas sekitar 30 orang dibawa dari *aldeia* Marco,⁸⁹¹ dan beberapa di antaranya dipukuli hingga babak belur di Koramil.⁸⁹²

780. Para penduduk dan pegawai negeri sipil diperintahkan untuk berkumpul di rumah Manuel Gama, di mana jasadnya telah disiapkan untuk penguburan. Tidak lama kemudian sejumlah pejabat senior pemerintahan dan militer setempat tiba di rumah tersebut, termasuk Bupati, M70 [seorang Timor], Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Jorge Tavares, Komandan Kodim, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, dan kepala intelijennya, Letnan Sutrisno, dan komandan milisi João da Silva Tavares. Atas perintah dari Letnan Sutrisno, empat orang pendukung kemerdekaan—Paulino Soares, José Pou Lelo, Antonio Soares, dan Manuel Mau Lelo Araújo—dibawa dari rumah tersebut ke gedung SGI yang bersebelahan dengan Koramil. Komandan Kodim, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian dan pemimpin milisi Halilintar, João Tavares, mendampingi Letnan Sutrisno ke Koramil. Para tahanan tersebut langsung ditembak mati oleh para anggota TNI dan milisi Halilintar. Setelah eksekusi, para pemimpin tersebut kembali ke rumah Manuel Gama, di mana mereka mengancam akan membunuh para pendukung kemerdekaan yang lain.⁸⁹³ Seorang saksi menceritakan bahwa:

Tak lama kemudian datanglah beberapa orang anggota tentara dari markas Koramil sambil menarik tangan teman-teman yang namanya Antonio Soares, José Pou-Lelo, Paulino [Soares], dan Manuel Mau Lelo de Araújo. Kemudian datanglah para petinggi militer dan sipil dari Maliana yaitu: Bupati Bobonaro M70 [dari Timor], Ketua DPRD Jorge Tavares, João da Silva Tavares[K11], Dandim 1636 Maliana Burhanudin Siagian, dan Kasi Intel Sutrisno. Bupati dan ketua DPRD masuk dalam rumah duka dan Dandim, Kasi Intel, dan João Tavares langsung menuju ke Koramil. Kami sedang sibuk menyiapkan tenda dan tiba-tiba mendengar bunyi senjata. Semua orang merasa terkejut,

* Jasad-jasad ini diidentifikasi sebagai: Carlito Mau Leto (32), Domingos Resi Mau (29), João Evangelista Lima Vidal (40), Paulino Soares (34), José Pou Lelo (37), Antonio Soares (45), dan Manuel Mau Lelo Araújo. (Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 197). Menurut Adriano João, ada delapan korban, termasuk seorang petani, João Matos, dari Meligo, kampung halaman Carlito Mau Leto. ("Kasus eksekusi 12-04-99 di Cailaco", manuskrip tak diterbitkan, 10 Juni 2004, Arsip CAVR)

† Pada umumnya, diperkirakan bahwa Manuel Gama dibunuh dalam penyerangan Falintil (lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 1116-04; 5535; Pendakwaan SCU 02/2003, paragraf 41), tapi menurut satu sumber lain, dapat diduga bahwa TNI pula adalah tersangka pembunuhan tersebut: "Informasi masih simpang siur sampai sekarang, siapa sebenarnya pelaku pembunuhan itu. Saling menuduh antara TNI dan Falintil di hutan." [Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 21 September 2004]

*karena empat orang itu langsung ditembak mati di depan dan samping Koramil jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah duka. Kemudian João Tavares bersama Dandim datang di rumah duka dan berteriak... "Kalian ini, semuanya GPK, seharusnya habis dibunuh."⁸⁹⁴ **

781. Pada hari yang sama, tiga korban lainnya, Carlito Mau Leto, Domingos Resi Mau,[†] dan João Evangelista Lima Vidal, ditahan di tempat terbunuhnya Manuel Gama, di dekat Desa Purogoa oleh para anggota TNI.⁸⁹⁵ Letnan Sutrisno dilaporkan ada di tempat itu ketika tentara dan milisi memukuli para tahanan tersebut. Carlito Mau Leto dan Domingos Resi Mau dilaporkan dikembalikan ke Koramil di Marco, Cailaco, dan dieksekusi.[‡] Istri João Evangelista menyaksikan pembunuhan terhadap suaminya:

Pada waktu itu kami dengar bunyi senjata, namun tidak tahu menembak apa. Tidak lama kemudian kami mendengar berita, bahwa Manuel Gama telah dibunuh oleh oknum yang tidak dikenal. Ketika itu juga, kami keluar dari rumah. TNI dari Koramil Cailaco datang mengangkut jenazah Manuel Gama. Mulai saat itu juga ada pemeriksaan setiap rumah yang ada di dekat lokasi kejadian. Anggota TNI dari Koramil Cailaco menangkap suami saya bernama João Evangelista Lima Vidal... Mereka menangkap, memukul dengan senjata di bibir mulut, menendang, dan mengikatnya. Dia dibawa ke lokasi kejadian Purogoa, Desa Meligo... Mereka mengusir saya dan berteriak: "Keluar dari sini"... Pada saat itu juga, mereka menarik suami saya dan menembaknya. Lalu saudara saya bernama Pedro menarik tangan saya dan berkata padaku: "Mari kita berangkat ke Marco, daripada kau di sini ditembak mati juga."⁸⁹⁶

782. Berbagai pembunuhan yang terjadi ini merupakan yang pertama dari serangkaian pembunuhan yang terjadi dalam dua minggu setelahnya terhadap para pendukung kemerdekaan di Subdistrik Cailaco.⁸⁹⁷ Sepanjang periode ini para tentara dan milisi menjarahi rumah-rumah, menahan dan menganiaya ratusan orang, memerkosa para perempuan dan gadis-gadis, serta membunuh sekitar 20 orang. Orang-orang yang dibunuh antara lain: Aprigio Mali-Tae dan Carlos Sama-Lelo,

* Menurut Pendakwaan Unit Kejahatan Berat (SCU) 2003/02, para perwira militer Bobonaro mengunjungi rumah almarhum Manuel Gama, di mana Letnan Sutrisno memberi perintah untuk menangkap keempat orang korban. Kemudian para perwira tersebut berjalan ke Pos Koramil, di mana Sutrisno memerintahkan bahwa para tahanan ditembak. Beberapa wawancara CAVR mengatakan bahwa hanya pemimpin sipil yang segera masuk rumah Gama, sementara pemimpin militer pergi langsung ke Koramil dan menembak para tahanan yang sudah ditahan di situ.

† Menurut Pernyataan HRVD 1116-04, korban ini bernama Domingos Leki Mau.

‡ Menurut Pernyataan HRVD 1865 dan Adriano João (dokumen yang tak diterbitkan, "Kasus eksekusi 12-04-99 di Cailaco") ketujuh korban dibunuh di depan kantor Koramil di Marco, Cailaco, namun Pendakwaan SCU 2003/02 (paragraf 76-83) menggambarkan lokasi eksekusi terhadap ketiga korban ini sebagai sebuah bukit di kampung Purogoa, dekat tempat kematian Manuel Gama.

keduanya dibunuh pada 17 April; Antono Basilio dan Armando Berlaku, keduanya dibunuh di kampung Manapa pada 19 April oleh milisi Dadurus Merah Putih; dan José Barros dan Cornelio Rodrigues da Silva, keduanya dibunuh pada 20 April.⁸⁹⁸

783. Pembunuhan yang terjadi pada 17 April diduga dilakukan oleh milisi Cailaco, Guntur Batu-Laka, Halilintar, dan SGI. Dadurus Merah Putih, yang dibentuk tak lama setelah pembunuhan-pembunuhan ini terjadi, diduga membunuh Antonio Maia dan Armando Berlaku pada 19 April, sementara anggota kelompok milisi Guntur Batu-Laka, Halilintar, BTT setempat, dan SGI diduga melakukan pembunuhan yang terjadi pada 20 April.⁸⁹⁹

784. Calistro da Cunha diculik pada 24 April oleh milisi Kaer Metin Merah Putih dan para anggota TNI, termasuk M66 dan M67 (keduanya orang Timor). Dia dibawa ke kampung Molop (Bobonaro), tempat dia diserahkan kepada sekelompok milisi Halilintar dan prajurit Koramil. Dia dibunuh oleh milisi Halilintar dari Maliana, di Omelai, Molop. Keluarga Calistro mengubur jenazah dia pada hari berikutnya di kuburan Guda.⁹⁰⁰

785. Tidak sampai dua minggu setelah pembantaian di Gereja Liquiça, para anggota milisi BMP dan Aitarak bersama TNI membunuh setidaknya 19 orang di Dili pada 17 April 1999 dalam penyerangan terhadap rumah Manuel Carrascalão.⁹⁰¹ Sekali lagi, serangan tersebut menunjukkan tanda bahwa militer dan milisi jelas bekerja sama.

786. Serangan terjadi setelah pertemuan akbar yang dihadiri sekitar 5.000 anggota PPI (Pasukan Pejuang Integrasi), depan kantor gubernur di pusat Kota Dili. Selama apel tersebut pemimpin Aitarak, M76, menghasut orang-orang untuk menangkap dan membunuh mereka yang tidak mendukung integrasi dengan Indonesia. Demonstrasi tersebut dihadiri oleh para pejabat senior pemerintah, termasuk Gubernur Abilio Soares; Bupati Dili, Domingos Soares; Komandan Korem Timor Timur, Kolonel Tono Suratman; Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri; dan empat perwira militer senior yang lain. Begitu demonstrasi tersebut selesai, M76 memimpin sekelompok besar milisi berpawai keliling Dili. Mereka menyerang berbagai sasaran sepanjang jalan sebelum tiba di rumah Manuel Carrascalão. Terdapat sekitar 150 pengungsi berlindung di sana, setelah melarikan diri dari berbagai serangan sebelumnya seperti yang terjadi di Liquiça. Dalam penyerangan atas rumah itu, milisi Aitarak dan BMP membunuh anak laki-laki Manuel Carrascalão yang masih remaja, Manuelito. Orang-orang lainnya dibunuh atau terluka parah oleh para milisi yang bersenjata golok dan pisau. Antara lain, korban mati adalah Eduardo de Jesus, Alberto dos Santos, Antonio da Silva Soares, Janeiro Pereira, Raul dos Santos Cancela, João dos Santos, Crisanto dos Santos, Rafael da Silva, Afonso Ribeiro, dan César dos Santos. Augustinho Benito X. Lay, menderita luka berat dalam

.....
* Menurut CAVR Tim Riset Survei Kuburan, "...sesudah wawancara selesai, dihitung seluruh batu kubur yang ditemukan di Kuburan Umum [di pinggir pantai] di Lebocoe-Maubara-Liquiça. 19 kuburan baru adalah kuburan para korban dari Maubara yang dibantai di rumah Manuel Carrascalão pada 17 April 1999." (Laporan Lapangan CAVR, 21 Oktober 2003).

penyerangan, tapi tetap hidup.* Beberapa orang pengungsi berusaha melompat pagar rumah tersebut untuk melarikan diri tetapi tidak berhasil karena rumah itu telah dikepung oleh orang-orang bersenjata. Banyak saksimata telah memastikan bahwa para anggota TNI berpakaian sipil dari Koramil di Maubara ikut serta dalam penyerangan tersebut. Kemudian, perwira tertinggi TNI untuk Timor Timur, Kolonel Tono Suratman menolak bertindak ketika Manuel Carrascalão memintanya menghentikan serangan itu.⁹⁰²

787. Pembantaian di rumah Manuel Carrascalão bukan satu-satunya insiden mematikan di Dili pada hari itu. Manuel Pinto, seorang anggota klandestin yang baru saja tiba di terminal Becora dari Baucau, dibunuh dalam serangan oleh para anggota TNI dan milisi, termasuk M75. Dia dibawa dengan luka-luka berat ke Klinik Motael, di sana dia menghembuskan napas terakhirnya.⁹⁰³

788. Setelah pembantaian 17 April, Desa Hera (Dili) menjadi fokus kekerasan yang intens. Pada 20 April Luis Dias, seorang anggota Fretilin, dibunuh oleh anggota milisi dan TNI di Hera.⁹⁰⁴ Pada atau sekitar 1 Mei Longuinhos da Silva de Jesus, seorang pendukung kemerdekaan yang cukup dikenal di Metinaro, ditangkap dan dibawa pergi oleh Komandan Aitarak M77. Jasadnya ditemukan beberapa hari kemudian di pantai dekat Hera.⁹⁰⁵ Pada atau sekitar 8 Mei Tomas Ximenes dan Sebastião Gusmão dibunuh oleh para anggota kelompok milisi Aitarak di Hera.⁹⁰⁶

Pembunuhan di Distrik Covalima, Ermera, Manufahi pada April 1999

789. Suatu peningkatan kekerasan yang tajam sepanjang April juga tercatat terjadi di tiga distrik lainnya: Covalima, Ermera, dan Manufahi.

790. Di Distrik Covalima kekerasan meningkat pada pertengahan April setelah milisi Laksaur dibentuk. Sementara pembunuhan-pembunuhan oleh milisi Mahidi di bagian timur distrik ini menurun pada periode ini, kelompok milisi Laksaur meningkatkan kegiatannya di daerah-daerah bagian tengah dan barat seperti Suai Kota, Tiloma, dan Maucatar. Di Suai Kota pada 12 April sekelompok anggota milisi Laksaur yang dipimpin oleh M78 membunuh anggota klandestin, Sabino Gusmão, di pompa pengisian bensin setempat di Suai. M78 diduga memerintahkan anakbuahnya membunuh Sabino yang ditikam oleh seorang anggota milisi bernama M79 dan meninggal karena luka-lukanya.⁹⁰⁷

791. Pada 13 April sekelompok anggota milisi Mahidi yang dipimpin oleh M81 menuju sebuah rumah di Desa Dais (Maucatar, Covalima), tempat beberapa mahasiswa dari Universitas Timor Timur (Unitim) tinggal sebagai bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mereka memukuli salah seorang mahasiswa

* Pernyataan HRVD 0354; 4629; 4661; 6940. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan-kejahatan Berat, Dakwaan terhadap Eurico Guterres, et al., Perkara No. 02/2002, paragraf 27-53. Pernyataan HRVD 6940 mengatakan bahwa seorang anggota milisi M80 dari Desa Leorema (Bazartete, Liquiça) terlibat secara aktif dalam pembunuhan yang terjadi di rumah Manuel Carrascalão. Pernyataan HRVD 4661 mengatakan bahwa seorang anggota milisi M80 ikut serta dalam pembunuhan terhadap Raul dos Santos.

João da Silva Ximenes hingga luka parah, dan dia meninggal tak lama setelahnya. Mereka juga membawa Bernadinho Simão ke rumah M82, Komandan Mahidi di Zumalai, tempat beberapa orang lain sudah terlebih dahulu ditahan sebelumnya. Tidak lama setelah itu Bernadinho Simão dan Inacio Barreto, yang juga ditahan di rumah M82, dibawa oleh milisi Mahidi. Keduanya tidak pernah terlihat lagi sejak itu.⁹⁰⁸ Di Desa Zulo, Mape/Zumalai, pada 18 April Komandan Mahidi di Zulo, M82, memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Alvaro Tilman yang mencoba melarikan diri dari penahanan di rumah M82.⁹⁰⁹

792. Penghilangan juga meningkat tiba-tiba pada April dan banyak dari penghilangan yang terjadi dilaporkan melibatkan anggota TNI. Para korban termasuk Mateus Gusmão.⁹¹⁰ Alvaro Barreto.⁹¹¹ Marçal Amaral.⁹¹² Felix Amaral, Abilio Mau Lear,⁹¹³ Justino Amaral, Amaro de Araújo,⁹¹⁴ dan Benedito do Nascimento.⁹¹⁵ Mateus Gusmão dan Alvaro Barreto juga dilaporkan hilang di Kodim Suai, dan Benedito do Nascimento hilang di Koramil di Salele (Tilomar). Marçal Amaral dan Felix Amaral dilaporkan dibawa pergi oleh para anggota TNI, dan Amaro de Araújo dibawa pergi oleh para anggota TNI dan Polri.

793. Pada 23 April sekelompok milisi Laksaur yang dipimpin oleh Olivio Moruk dan prajurit TNI menyerang dusun Nikir, Raihun (Tilomar), membunuh Tomás Cardoso, Paulo Ximenes, dan Aleixo Ximenes.⁹¹⁶ Mereka membawa Rodificus Rabo ke hutan. Dia tidak pernah terlihat lagi dan diyakini bahwa dia sudah dibunuh.⁹¹⁷ Dua hari kemudian kelompok yang sama mencari orang-orang yang telah melarikan diri ke gunung-gunung dan membunuh Yosef Leki, Tito Mali, dan Januario Maia.⁹¹⁸

794. Di Distrik Ermera pada April dipersenjatainya kelompok-kelompok milisi setempat oleh TNI mengakibatkan terjadinya peningkatan kekerasan. Komisi telah menerima informasi bahwa pada April, seorang mantan Komandan Darah Merah, M83, menerima tujuh senjata otomatis dan empat kendaraan dari komandan Kodim Ermera. M83 punya sekitar 200 anggota milisi di bawah kendalinya di Hatolia.⁹¹⁹ Selama April, di Hatolia Armando Gomes dan Calistro dilaporkan telah dibunuh di Desa Leimea Kraik,⁹²⁰ Marito Tavares dan Antonio de Deus di Kukara, Desa Manusea, dan seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Venancio di Desa Ailelo (Hatolia). Komisi juga menerima informasi bahwa pada April, kelompok milisi M83 menyerang para pendukung kemerdekaan dan membakar rumah-rumah di Kukara sebagai pembalasan atas terbunuhnya salah satu anggotanya oleh CNRT. Komisi diberitahu bahwa M83 menembak mati dua anggota CNRT bernama Mau Laho dan Domingos.⁹²¹ Pada awal April di Lasau (Atsabe), Adelino Magalhães dan Velsior Pelo diberitakan telah dibunuh oleh satu atau lebih anggota TNI Koramil Atsabe.⁹²² Menurut kesaksian para saksimata, Adelino ditutup matanya, dilempar ke dalam jurang, dan ditembak.⁹²³

795. Pada 11 April, Filipe dos Santos dan seorang mahasiswa lainnya dikabarkan telah ditembak mati oleh TNI dan pada 14 April Helder Martins dikabarkan ditembak mati oleh TNI dan Polisi.⁹²⁴ Menjelang akhir April Florindo de Deus ditangkap, ditahan selama dua minggu di Atsabe, dan dalam perjalanan ke Gleno dikabarkan dibunuh. Seorang saksimata menduga bahwa Tim Pancasila bertanggung jawab atas

kematian Florindo de Deus.⁹²⁵ Pada atau sekitar 20 April sekelompok anggota TNI dan milisi melancarkan operasi di Lebu Rema, desa Samalete (Railaco, Ermera) dan dalam operasi itu seorang pemuda desa, Manuel Piedade, dikabarkan telah dibunuh oleh seorang milisi Timor.⁹²⁶

796. Di Distrik Manufahi, pada 17 April, setelah peresmian PPI dan serangan yang terjadi setelahnya terhadap para pendukung kemerdekaan di Dili, milisi Ablai memulai serangkaian aksi kekerasan.⁷ Di Same, pada 17 April, milisi Ablai yang dipimpin oleh Bernadino da Costa menyerang masyarakat Tirilolo, Holarua. Dalam serangan tersebut mereka membunuh Luis Boco-Siri, yang rumahnya dijadikan tempat persembunyian para pendukung kemerdekaan, dan Agapito de Araújo.⁹²⁷ Pada hari yang sama, para anggota milisi Ablai, termasuk Bernadino da Costa, menyerang Desa Gratu, di Subdistrik Same. Karena para laki-laki lari ke gunung-gunung, para perempuan dipaksa memanggil pulang suami mereka ke desanya. Beberapa laki-laki keluar dari persembunyian kembali ke desa, termasuk Carlito de Araújo. Dia diinterogasi dan dibunuh, diduga pelakunya adalah M85 dan M86.⁹²⁸ Pada 17 April Duarte Lopes (Duarte Bere Siri) diduga dibunuh oleh M87 di Orema, Desa Holarua.⁹²⁹ Pada 24 April Afonso da Costa, seorang mahasiswa Universitas Timor Timur berusia 18 tahun, ditangkap di Anilumu, desa Holarua, dibawa ke puncak gunung di atas Orema, dan diduga dibunuh oleh M85 dan M88.

Menjadikan aktivis prokemerdekaan, anggota CNRT, pelajar, dan mahasiswa sebagai sasaran pembunuhan

797. Suatu pola lain yang terlihat dari data yang dikumpulkan oleh Komisi adalah bahwa militer Indonesia dan kelompok-kelompok milisi secara spesifik menjadikan para aktivis prokemerdekaan sasaran sepanjang periode ini. Hal ini terutama terjadi terhadap mereka yang terang-terangan melakukan berbagai kegiatan prokemerdekaan dan secara aktif terlibat dalam kampanye—baik sebagai anggota CNRT maupun anggota berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya seperti Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur (DSMPTT). Distrik Dili pada khususnya menjadi sasaran utama karena alasan ini. Contohnya, Benedito de Jesus dibunuh pada 14 Februari, Joaquim de Jesus pada 24 Februari, dan João Teixeira pada 11 Maret. Dalam peristiwa yang terjadi terhadap João Teixeira, dia disiksa dan dipenggal. Dalam tiga kejadian tersebut, para anggota pasukan TNI dan polisi terlibat.⁹³⁰ Berbagai peristiwa pembunuhan yang sama terus berlangsung sepanjang April dan Mei di Dili dan Hera.⁹³¹

798. Misalnya pada April, para mahasiswa dari Unitim (Universitas Timor Timur) sedang mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Suai, Distrik Covalima. Pos mereka diserang oleh milisi Mahidi, dipimpin oleh M81, pada 11 dan 13 April. Penyerangan yang kedua mengakibatkan kematian dua mahasiswa, Bernadinho dan João, keduanya

* Komisi juga memiliki bukti mengenai setidaknya empat pemerkosaan oleh milisi Ablai yang terjadi dalam penyerangan ini; (Lihat Bab 7.7: Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual)

dipukul dan ditikam.* Di Maucatar, pada April, milisi Laksaur dan para anggota TNI menangkap dan memukul Mateus Gusmão, karena mereka tidak dapat menangkap seorang lain yang sedang mereka cari. Pada hari esoknya, Mateus Gusmão dibawa dengan motor ke kantor Kodim, dan tidak pernah dilihat sejak itu.⁹³²

799. Politeknik di Hera dianggap sebagai pusat kegiatan mahasiswa prokemerdekaan, dan diduduki oleh para anggota TNI dan milisi pada 10 Mei. Pada awal Mei, dua mahasiswa prokemerdekaan dari Politeknik, yakni Augustino de Carvalho dan Estevão Xavier Pereira, diduga telah disiksa dan dibunuh pada saat ditahan oleh TNI/milisi di politeknik tersebut. Jasad dua mahasiswa tersebut kemudian ditemukan di Akanunu dekat Hera.⁹³³

800. Sepanjang periode ini pembunuhan yang bersifat sporadis terjadi di seluruh wilayah Timor-Leste, dengan menjadikan para pendukung kemerdekaan sebagai sasaran. Pada Maret 1999 serangkaian penculikan dan pembunuhan oleh milisi BMP terjadi di Distrik Liquiça. Seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Mau Kuru diduga telah dibunuh di Palistela, Guguleus, (Maubara, Liquiça) oleh para anggota kelompok milisi BMP, termasuk M88 dan M89, karena dia dituduh telah membakar bendera Indonesia.⁹³⁴ Dalam bulan yang sama, Domingos Carion ditembak mati oleh sekelompok anggota TNI di Mato, Desa Lisadila (Maubara, Liquiça). Domingos Carion adalah anggota kelompok prokemerdekaan yang sedang menuju Galai, Desa Lisadilia, untuk mengevakuasi penduduk desa ke gunung-gunung.⁹³⁵

801. Pada Maret beberapa orang lelaki hilang di Baucau sementara mereka sedang ditahan oleh TNI. Dalam satu kejadian, para anggota TNI mengejar lima orang lelaki ketika mereka berjalan dari Caicido ke Buburaga di Subdistrik Baucau. Dua di antaranya—Carlito dan Abreu—melarikan diri, namun Apeu, João, dan Marçal dibawa ke lapangan terbang Baucau, dan tidak pernah dilihat lagi.† Menurut sebuah kesaksian lain, tiga orang—Marçal, Abrio, dan Angelino*—ditangkap di Baucau oleh para anggota Batalion 745, karena dicurigai sebagai anggota Falintil. Mereka dibawa ke markas tentara dan kemudian hilang.⁹³⁶

802. Komisi juga telah menerima informasi yang menyebutkan bahwa setidaknya tiga orang dibunuh atau hilang pada April di Distrik Manatuto.[§] Pada 16 April,

* Pernyataan HRVD 0085. Menurut sebuah laporan oleh salah satu LSM HAM Timor-Leste, Yayasan HAK, kedua mahasiswa tersebut diculik oleh para anggota milisi Mahidi sehingga hilang, pada 12 April, ketika mereka berjalan dari Suai ke Desa Beco.

† Pernyataan HRVD 7675-02. Menurut Submisi OHCHR kepada CAVR, lima pemuda, yang namanya tidak dikenal, ditahan pada 17 Maret 1999, sebagai balas dendam untuk pembunuhan prajurit TNI pada bulan yang sama. Jasad-jasad tiga di antara pemuda tersebut dilaporkan ditemukan beberapa minggu kemudian dalam sebuah kuburan dangkal di Triloka, dekat lapangan terbang Baucau, (April 2004), hal. 140.

‡ Di kejadian pertama, disebut nama Abreu dan nama Marçal; dalam kejadian kedua, disebut Marçal dan nama Abrio (juga ditulis Abriu). Penyelidikan dipandang perlu untuk mencari tahu apakah pernyataan tersebut merupakan versi berbeda mengenai individu yang sama.

§ Menurut Submisi OHCHR kepada CAVR, pasukan TNI menyelenggarakan operasi besar di Laclubar, yang tampaknya merupakan balasan atas pembunuhan terhadap komandan milisi Tim Morok, yang juga seorang anggota TNI, Filomeno Lopes da Cruz, yang diduga dilakukan oleh Falintil. (April 2004, hal. 178)

Aquelino da Costa Guterres berencana bertemu seorang komandan Falintil di Manatuto, namun dia ditangkap oleh prajurit-prajurit TNI dan tidak pernah dilihat lagi.⁹³⁷ Pada 24 atau 25 April, Marcelino Soares dan Mateus Soares dikabarkan ditangkap oleh milisi Timor di Desa Pualaka. Mateus Soares adalah murid di sekolah menengah pertama di Dili berusia 16 tahun. Mereka dibawa ke Gunung Hatuharik di Desa Manelima, Subdistrik Laclubar, tempat mereka dikabarkan dibunuh.⁹³⁸

803. Ketika CNRT membuka kantor di berbagai distrik, mereka mulai mendapat ancaman dari milisi dan militer. Setidaknya dalam satu kasus, serangan terhadap kantor CNRT sepanjang periode ini mengakibatkan satu kematian. Pada 9 April 1999 Komandan Kodim Ermera, Letnan Kolonel Muhamad Nur bertemu dengan para pemimpin milisi Darah Integrasi, FPDK, dan BRTT di ibukota distrik tersebut, Gleno. Keesokan harinya TNI dari Kodim 1637 dan para milisi membakar habis markas CNRT di Gleno, dan membunuh seorang pendukung CNRT dan anggota DPRD yang terpendang, Antonio Salsinha Lima.⁹³⁹

804. Pada 9 Mei seorang anggota klandestin, Eugenio Antonio Castro, dikabarkan telah ditembak oleh anggota kepolisian dan milisi Aitarak di Bemori (Dili), saat dia bersama banyak orang membakar ban-ban di jalan.⁹⁴⁰ Keesokan harinya sekelompok anggota milisi dikabarkan datang ke Bemori dan menyerang seorang anggota klandestin yang lain, Flavio Urbano Saldanha Ribeiro, di rumahnya. Seorang kerabat korban menduga bahwa penyerang adalah milisi Besi Merah Putih yang menembak korban, membacok kepalanya, menggorok lehernya, dan memotong alat kelaminnya.⁹⁴¹

805. Pada 16 Mei kelompok yang terdiri atas anggota TNI, SGI, dan Tim Pancasila melancarkan serangan besar-besaran ke Desa Atara (Atsabe, Ermera) pada sekitar pukul 05.00. Kelompok tersebut termasuk Komandan SGI di Atsabe, M91 [seorang Timor], dua orang Babinsa, M92 dan M93 [keduanya orang Timor] serta seorang anggota TNI dari Timor, M94. Dalam serangan itu kelompok tersebut membunuh enam penduduk desa. Para korban dicurigai ikut serta dalam kegiatan klandestin, termasuk João Sarmento, Urbano Pereira, Justiliano Pereira, Rogério Talo Ati, Abel de Jesus, dan Paulo Gonçalves.⁹⁴²

Kematian dalam penahanan

806. Selain berbagai laporan mengenai terjadinya penangkapan besar-besaran dan penyiksaan dalam tahanan, Komisi juga menerima banyak sekali laporan kematian yang terjadi dalam penahanan sepanjang periode ini. Sebagai contoh, Fernando da Costa, seorang pendukung CNRT, ditahan pada 5 April di Liquiça kota oleh kelompok yang terdiri atas TNI, milisi BMP, dan polisi. Setelah dipukuli hingga luka parah di luar rumahnya, dia dibawa ke Polres Liquiça, tempat dia ditahan selama dua hari. Pada 7 April dia dikabarkan dikeluarkan dari selnya dan dipindahkan ke Koramil Maubara, didampingi oleh Sersan M62 dan seorang komandan BMP, M65, dan di sana dia dikabarkan mati setelah ditikam berkali-kali.⁹⁴³

807. Komisi menerima beberapa laporan bahwa pada 15 April Evaristo Lopes disiksa dan dibunuh oleh TNI dan milisi Tim Alfa ketika berada dalam penahanan dan di

bawah pengawasan seorang anggota Kopassus, Sersan M96 [seorang Indonesia] di Lautém.⁹⁴⁴ Komisi juga menerima laporan mengenai kematian setidaknya tiga orang sebagai akibat penyiksaan yang dilakukan selama interogasi oleh milisi dan anggota Koramil di Lacluta, Viqueque, pada 30 April.⁹⁴⁵

808. Pada 8 Mei di Distrik Bobonaro, sejumlah anggota TNI, termasuk Sersan M97 [orang Timor] dari divisi intelijen Kodim Maliana dan anggota Dadurus Merah Putih, menangkap Manuel Pinto Tilman dan Abilio Cardoso di Lalebol (Bobonaro, Bobonaro) dengan tuduhan bahwa mereka adalah anggota Falintil. Setelah ditahan di Bobonaro Kota, pada 15 Mei keduanya dikabarkan dibawa ke jembatan Nunura di Maliana dan dibunuh. Dakwaan yang diajukan oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat mengatakan bahwa Mau Buti menembak pinggul bagian bawah Manuel Pinto Tilman, sementara Inacio Conceição menikamnya. Dakwaan tersebut juga mengatakan bahwa Mau Buti menembak kepala Abilio Cardoso.⁹⁴⁶

809. Selama periode ini milisi BMP di Liquiça juga dilaporkan membunuh sejumlah orang setelah menjadikan mereka tahanan. Pada 5 Mei, dua laki-laki bernama Antonio dan Rosario dikabarkan disiksa sampai mati oleh sekelompok anggota BMP di atau di dekat pos BMP di *aldeia* Ediri, Vatuvou (Maubara, Liquiça).⁹⁴⁷ Pada 10 Mei, Albertino Martins disebutkan telah ditembak mati oleh seorang anggota BMP di Sungai Gicu di Maubara.⁹⁴⁸ Pada 15 Mei kelompok yang terdiri atas para anggota BMP dan TNI melancarkan operasi di Desa Asumanu, Subdistrik Liquiça. Pada hari itu tiga orang penduduk desa di Asumanu, yang dikenal hanya dengan nama panggilan mereka, yakni Moises, Martinho, dan Natalino, terlihat diikat dan ditutup matanya, beberapa waktu kemudian mereka ditemukan di perkuburan desa dalam keadaan sudah mati.⁹⁴⁹

Berbagai pembunuhan lainnya, Januari-Mei 1999

810. Tabel berikut memberikan rangkuman kejadian pembunuhan di luar hukum dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi yang terjadi di distrik-distrik di mana tingkat kekerasan fatal relatif lebih rendah.

| Tabel 53: Pembunuhan di luar hukum yang dilaporkan kepada Komisi, Januari-Mei 1999 | |
|--|--|
| Distrik | Ringkasan |
| Ainaro | <p>Pada 3 Januari di Manutasi (Ainaro) anggota kelompok milisi Mahidi mendirikan pos pemeriksaan di Fatuk Maria. Pada saat pendukung kemerdekaan mendatangi pos tersebut untuk memprotes keberadaannya, anggota milisi, termasuk M99, M100, dan M101, menembaki mereka. Julio de Araújo dan Reinaldo Martins ditembak mati dan lima orang lainnya luka-luka dalam serangan tersebut.⁹⁵⁰</p> <p>Pada 26 Februari sekelompok anggota milisi Mahidi, termasuk M102, M103, dan M104 membunuh seorang pendukung kemerdekaan, Joanico Bianco, di Cassa.⁹⁵¹</p> |

| | |
|----------|---|
| Baucau | <p>Pada 5 Februari, para anggota TNI dari Unit Rajawali menangkap Duarte Guterres di Loikiku, Uai Laha (Venilale). Para anggota TNI tersebut menembak kakinya, memasukkannya ke dalam sebuah gua, dan menutup gua itu dengan sebuah batu besar. Kemudian Guterres meninggal dunia.⁹⁵²</p> <p>Pada 26 Maret sejumlah prajurit TNI, termasuk Sersan Satu M105 [dari Indonesia] dari divisi intelijen Kodim, menembak mati dua orang laki-laki yang lari menghindari mereka dan seorang perempuan yang kebetulan sedang bekerja di kebun di dekat mereka di Gariuai (Baucau). Para korbannya adalah Ildefonso Pereira (Eldefonso Faria), Nazarito Xavier, dan Estefania Freitas. Mereka semua pendukung kemerdekaan, meskipun tidak jelas apakah para pelaku telah mengetahui hal itu pada saat membunuh.⁹⁵³</p> |
| Dili | <p>Pada atau sekitar 25 Januari, Lucio Ribeiro dari Comoro, Dili, yang telah hilang selama tiga hari dikabarkan telah ditemukan dalam keadaan mati di suatu lokasi bekas daerah transmigrasi di Loes (Maubara, Liquiça).⁹⁵⁴</p> <p>Pada 24 Februari, Joaquim de Jesus dan seorang lainnya dikabarkan telah ditembak mati di Becora oleh para anggota milisi Aitarak bersama dengan anggota TNI.⁹⁵⁵</p> |
| Ermera | <p>Pada Mei, Albino da Costa⁹⁵⁶ dibunuh oleh BTT dan Partisan TNI, dan Constancio Carvalho⁹⁵⁷ dibunuh oleh para anggota milisi Darah Merah Putih (DMP). Keduanya dilaporkan dibunuh di Desa Mauabu (Hatolia).</p> <p>Di Kaiturloa, Desa Urahou, Albino de Carvalho dibunuh oleh unit BTT/TNI,⁹⁵⁸ dan Abrão Salsinha Soares dibunuh oleh milisi DMP.⁹⁵⁹ Bernabel Araújo dibunuh di Desa Asulau oleh milisi DMP.⁹⁶⁰ Pada Juni, Luis Alves dikabarkan telah dibunuh di Raitumura, Desa Urahou, oleh milisi DMP⁹⁶¹ dan Francisco Alves Caralhera di Liimau, Desa Manusea, juga dibunuh oleh milisi DMP⁹⁶².</p> <p>Pada atau sekitar 30 Mei di Desa Hatugau (Letefoho), Sekretaris CNRT Nurep, Luis Martins, dilaporkan dipukuli hingga tewas oleh para SGI.⁹⁶³</p> |
| Lautém | <p>Seorang anggota klandestin Rosa Maria dilaporkan dibunuh oleh seorang anggota Tim Alfa dalam persembunyiannya di hutan pada Januari.⁹⁶⁴</p> <p>Pada atau sekitar 21 April seorang anggota klandestin, Evaristo Lopes, disiksa dan ditikam hingga mati oleh para anggota milisi dan seorang TNI di markas Tim Alfa yang bertempat di pos Kopassus di Lauara (Lospalos). Anggota Tim Alfa tersebut, João da Costa, dan Kopassus Sersan M96 [orang Indonesia], menikam Evaristo Lopes.⁹⁶⁵</p> <p>Di Somoco, Lospalos, Virgilio de Sousa dibunuh di rumahnya oleh para anggota Tim Alfa.⁹⁶⁶</p> <p>Pada 23 April di sebuah bukit yang bernama Panili Cacaven, Lospalos, Lamberto da Silva, mantan anggota Falintil, dibunuh oleh anggota BTT, seorang Kopral TNI, M165 [orang Timor] dan seorang Timor yang lain, M166.⁹⁶⁷</p> |
| Manatuto | <p>Pendukung kemerdekaan lainnya, Humberto Casamiro Barros, ditembak mati oleh Filomeno Brito dalam serangan oleh milisi Mahadomi terhadap rumah aktivis prokemerdekaan terkenal, Gregorio Sebastião Gusmão, di Desa Hatularan (Laleia).⁹⁶⁸</p> <p>Sepanjang periode pra-Jajak Pendapat ini Bupati M107 mengumpulkan lima orang kepala desa dan Camat Soibada dan menginterogasi mereka sehubungan dengan kegiatan klandestin mereka. Setelah pemeriksaan itu, para kepala desa diizinkan pulang, tetapi Camat Soibada Zolino, tetap tinggal. Dia dan seorang guru bernama Vicente kemudian dibunuh.⁹⁶⁹</p> |

| | |
|----------|---|
| Manufahi | <p>Moises Soares ditahan oleh Mahidi di Desa Beikala (Hato Udo, Ainaro). Pada 28 April, sekelompok milisi Ablai dan para anggota Kopassus di bawah komando Kapten M108 [orang Indonesia] melakukan perjalanan dari Same ke Beikala untuk menawan Moises Soares, yang dicurigai sebagai pembunuh seorang anggota Kopassus di Alas. Para anggota Kopassus dan milisi Ablai membawa Moises Soares di dalam kendaraan menuju Subdistrik Same. Keesokan harinya Moises Soares ditemukan telah tewas di Betano (Same).⁹⁷⁰</p> <p>Pada Mei di Subdistrik Alas, José Antonio ditangkap oleh anggota Koramil M104 [orang Timor], di Sungai Kelan. Dia dibawa ke Dotik (Alas) dan tidak pernah terlihat lagi.⁹⁷¹</p> <p>Di Feriksare, Taitudal (Alas), Domingos Sanches de Jesus ditangkap dan dibawa ke Koramil. Dia dipukuli hingga babak belur dan dilaporkan dia meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya.⁹⁷²</p> <p>Di Subdistrik Turiscail seorang laki-laki bernama Angelito dibunuh pada Mei ketika sekelompok anggota milisi bersama dengan para anggota Batalion 743 melancarkan sebuah operasi di Desa Liurai (Turiscail) atas perintah Komandan Koramil 105 [orang In^donesia].⁹⁷³</p> |
| Oecussi | <p>Pada April 1999, setelah milisi Sakunar dibentuk secara resmi, seorang anggota klandestin bernama Bobo Noni di Subdistrik Passabe dibunuh oleh para komandan Sakunar M111 dan M11. Situasi terjadinya pembunuhan tersebut tidak jelas namun pada waktu yang bersamaan ternak penduduk desa juga dilaporkan telah dicuri.⁹⁷⁴</p> |
| Viqueque | <p>Pada 30 April di Subdistrik Lacluta para pemimpin Desa Ahic dipukuli dan ditendangi oleh Babinsa dan Milsas. Pedro da Costa Araújo meninggal karena luka yang dia derita. Para saksi mata memberi kesaksian bahwa para anggota TNI ada di tempat kejadian, termasuk Komandan Koramil M113.⁹⁷⁵</p> <p>Komisi telah menerima informasi bahwa pada 28 Mei, Caetano Duarte Gusmão dan Vicente Alves dibunuh oleh seorang atau beberapa orang yang identitasnya tidak diketahui. Pembunuhan tersebut terjadi di suatu lokasi yang tidak berpenghuni, dikenal sebagai Weasin-Wehasan Mota Laran, dekat Desa Ahic (Laclut*).⁹⁷⁶</p> |

Juni–30 Agustus: Pembunuhan di luar hukum sejak kedatangan UNAMET hingga Jajak Pendapat

811. Dalam periode setelah kedatangan UNAMET dan para pengamat internasional pada Juni tetapi sebelum pengumuman hasil Jajak Pendapat 4 September, secara signifikan terdapat lebih sedikit laporan kasus eksekusi dan penghilangan. Namun, bahkan selama periode ini, ada masa-masa, seperti selama periode kampanye dan pada hari-hari setelah pemungutan suara itu sendiri, ketika kekerasan meningkat. Secara keseluruhan, Komisi masih menerima laporan pembunuhan dan penghilangan selama periode ini di delapan dari tiga belas distrik: Bobonaro, Dili, Oecussi, Liquiça, Ermera, Viqueque, Lautém, dan Covalima.

812. Distrik-distrik yang melaporkan angka terbanyak pembunuhan di luar hukum dan penghilangan kepada Komisi adalah Bobonaro (sembilan kematian), Dili (lima kematian dan satu penghilangan, dan Oecussi (sepuluh kematian dan dua penghilangan).

Tabel 54: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi, Juni hingga 30 Agustus 1999

| | |
|----------|--|
| Bobonaro | <p>Milisi Halilintar dilaporkan membunuh dua orang laki-laki di Subdistrik Atabae selama periode ini. Agostinho Ximenes dilaporkan ditangkap pada 6 Juli di Desa Aidabaleten (Atabae, Bobonaro), dibawa ke rumah João Tavares di mana dia disiksa dan kemudian dibawa ke gunung tempat dia dibunuh.⁹⁷⁷</p> <p>Feliz Tabesi Maria dilaporkan ditangkap di Desa Hataz pada 28 Agustus ketika dia berusaha lari ke gunung dan dibunuh.⁹⁷⁸</p> <p>Pada Agustus para anggota kelompok milisi Dadurus Merah Putih, mungkin bersama para anggota TNI, dilaporkan membunuh empat orang pendukung kemerdekaan di Anapal, Desa Molop, Bobonaro. Keempat korban tersebut adalah Cipriano Espirito Santo, José Efi, Armindo Barreto Moniz, dan Natalino Moniz.⁹⁷⁹</p> <p>Di Subdistrik Maliana pada 18 Agustus, milisi Dadurus Merah Putih, di bawah komando Sersan TNI M114 [orang Timor], membawa Augusto Martins, seorang mahasiswa dan anggota kampanye prokemerdekaan, dari sebuah mikrolet di pangkalan di desa Lahomea. Dia dibawa ke rumah Sersan M114 di mana dia dipukuli dan ditikam. Sore hari dia meninggal. Polisi Sipil (Civpol) UNAMET bersama dengan Polri pergi ke lokasi tempat mayat, tetapi Polri gagal melaksanakan investigasi.⁹⁸⁰ Keesokan harinya para anggota Dadurus Merah Putih dilaporkan membunuh Augusto Marques, seorang mahasiswa, di desa Lahomea.⁹⁸¹</p> |
| Dili | <p>Pada 19 Juni tiga pemuda dari Lospalos, yang identitasnya tidak diketahui, dilaporkan dibunuh di Becora.⁹⁸²</p> <p>Pada 25 Juli José Soares dilaporkan dibunuh oleh tembakan dari mobil yang sedang melaju di dekat Fatu-Ahi.⁹⁸³ Pada 1 Agustus Angelino Amaral (Sabino) mati ditembak di luar kantor distrik UNAMET di Lahane.⁹⁸⁴</p> <p>Pada 27 Agustus Francisco Nascimento menghilang setelah dia berangkat ke kantor. Istrinya, yang memberikan kesaksian kepada Komisi, yakin bahwa suaminya disiksa di Hotel Tropical, markas kelompok milisi Aitarak, dan bahwa mayatnya dikuburkan di belakang lapangan helikopter bersama dua mayat lain.⁹⁸⁵</p> |
| Oecussi | <p>Pada Juni, seorang aktivis prokemerdekaan yang dikenal di Desa Lalisuk (Pante Makasar), diculik dan menghilang. José Talua'e, pemimpin setempat kelompok klandestin muda Fitun, dilaporkan dikunjungi oleh anggota intelijen Kodim bernama Bertolomeu dan diminta untuk pergi ke Kefamenanu, Timor Barat, untuk membeli knalpot sepeda motor. Ketika istri korban pulang ke rumah, sang istri mengetahui suaminya tidak pulang. Korban tidak pernah pulang sejak saat itu.⁹⁸⁶</p> <p>Inacio Haumetan, seorang pendukung CNRT di Oecussi, dibunuh pada 20 Agustus oleh milisi Sakunar.⁹⁸⁷</p> <p>Paling tidak enam pendukung prokemerdekaan dibunuh, tak terhitung lainnya yang ditahan dan dipukuli, dan sejumlah besar perusakan harta milik dilakukan oleh milisi Sakunar dan militer Indonesia antara 28 dan 30 Agustus. Paling tidak tiga anggota CNRT dibunuh pada 28 Agustus ketika milisi Sakunar, bersama TNI, Brimob, milisi Aitarak dari Dili, dan milisi BMP dari Liquiça, menyerang para pendukung prokemerdekaan.⁹⁸⁸ Pada 29 Agustus, dua orang laki-laki yang dikenal sebagai anggota CNRT menghilang setelah ditahan di Malelat (Passabe) oleh milisi Sakunar yang dipimpin oleh M115.⁹⁸⁹</p> |

813. Pembunuhan lain yang dilaporkan kepada Komisi termasuk eksekusi orang-orang yang dicurigai sebagai anggota klandestin di Hatolia (Ermera) oleh milisi Darah Merah Putih pada 8 Juni⁹⁹⁰ dan 16 Juni.⁹⁹¹ Pada 8 Agustus Mariano da Costa, seorang pegawai UNAMET, diduga ditahan oleh sekelompok anggota BMP dan TNI di Dato (Liquiça, Liquiça) atas perintah Sersan M62 dan seorang komandan BMP, MM65. Mariano diduga dieksekusi oleh anggota milisi BMP. Jasadnya tidak pernah ditemukan.⁹⁹²

814. Walaupun hanya ada sedikit laporan tentang pembunuhan selama masa pendaftaran pemilih, gangguan dan intimidasi terhadap penduduk sipil terus berlanjut. Komisi menerima informasi tentang seorang laki-laki bernama Filipe yang dilaporkan diculik oleh sepuluh orang anggota milisi BMP setelah mereka mendaftarkan diri di pusat registrasi UNAMET Kailema di Lebuhei, Dato (Liquiça). Dalam kesaksiannya, istri Filipe menyatakan:

*Pada tanggal 24 Juli, saya bersama suami pergi untuk mendaftarkan diri guna mengikuti jajak pendapat. Setelah pendaftaran kami masih istirahat sebentar, tiba-tiba sepuluh orang mendatangi saya dan suami saya... Mereka menangkap suami saya dan membawanya menuju lokasi Fatukesi [Liquiça]. Sejak itu suami saya tidak pulang sampai sekarang. Dan sayapun tidak tahu lagi apakah suami saya masih hidup atau sudah mati.*⁹⁹³

815. Selama masa kampanye, yang berlangsung mulai 14 sampai 27 Agustus, terjadi banyak insiden kekerasan, termasuk pembunuhan bersasaran para aktivis prokemerdekaan, pelajar, dan tokoh-tokoh lain yang berkampanye secara terbuka untuk kemerdekaan. Sebagai contoh, pada 11 Agustus, sehari setelah pembukaan kantor mereka di Viqueque, anggota Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur (DSMPTT) diserang oleh milisi.* Pada tiga serangan yang terpisah, tiga pelajar dibunuh: Rogério Soares (Rogério Amaral), Mariano Soares Pinto (Mariano Gusmão), dan Carlos Sarmento.⁹⁹⁴

816. Hari terakhir kampanye bagi pihak pro-otonomi adalah 26 Agustus. Para pendukung otonomi melancarkan kampanye besar-besaran di seluruh Dili. Mereka menyerang dan membakar gedung-gedung, melukai dua orang wartawan, dan membunuh delapan orang. Insiden penembakan yang terjadi sore hari di Kulu Hun didahului oleh bentrokan antara juru kampanye pro-otonomi dan pemuda prokemerdekaan di daerah ini. Ketika sekelompok pendukung otonomi melewati jembatan Kulu Hun, pemuda prokemerdekaan mulai melempari mereka dengan batu. Dalam suasana yang sangat tegang ini, seorang laki-laki bernama Marcus, yang mengenakan kaus pro-otonomi, dikejar dan ditusuk dari belakang. Dia segera dibawa

* Submisi OHCHR juga menggambarkan penyerangan terhadap kantor CNRT di Viqueque pada 11 Agustus. Dalam suatu kejadian lain di Distrik Viqueque, Domingos Aparicio dan seorang lain bernama Idelfonso dilaporkan dibunuh oleh anggota milisi Naga Merah di Desa Beasu, (Viqueque). Kejadian tersebut dilaporkan terjadi dalam periode pra-Jajak Pendapat, namun tanggal-tanggal persis tidak diketahui. Pernyataan HRVD 4127; Amnesty International, ASA 21/49/99.

ke rumah sakit di Bidau. Pada pukul 3 sore, anggota Brimob mulai menembak. Kerumunan berpecah dan lari dalam kepanikan. Dalam penembakan tersebut empat pemuda dibunuh. Salah satunya adalah Bernadinho Joaquim Afonso Guterres, seorang mahasiswa dari Universitas Satya Wacana, di Salatiga, Indonesia, yang kembali ke Timor Leste untuk mengikuti Jajak Pendapat. Kejadian pembunuhannya direkam dalam film, dan foto jasadnya kemudian muncul di sampul majalah *Time* pada Desember 1999. Seorang saksi mata bercerita kepada Komisi:

Tiba-tiba saya lihat Bernadinho berlari dari arah jembatan melewati depan kami. Dengan spontan saya berteriak kepadanya, "Bernadinho [Bernadinho], awas!" Banyak polisi mengejarnya. Dua orang polisi bersiap untuk menembak. Satu dari sebelah kiri dekat Toko Virgo menembak ke atas, satu lagi dari sebelah kanan dekat Kebararaan Santa Caritas yang menembak tepat ke arah Bernadinho. Kira-kira delapan meter dari tempat saya berdiri.

Polisi menembak Bernadinho dari belakang. Saya tidak tahu bagian badannya yang mana yang ditembaknya, tetapi Bernadinho langsung jatuh ke tanah. Banyak darah tertumpah di jalanan. Tangan dan kakinya bergerak kira-kira lima menit, dan kemudian gerakan itu berhenti.⁹⁹⁵

817. Ketiga korban lainnya adalah Adelino de Jesus da Silva (23), Virgilio da Costa Rodrigues (Azildo) (26), dan Atanazio Moniz de Jesus (Ameta) (23). Keluarga dan teman para korban memberitahu Komisi bahwa mereka bertiga adalah anggota muda klandestin di daerah itu, dan mereka terkena peluru masing-masing di muka, dada, dan leher.⁹⁹⁶

818. Situasi juga bertambah buruk di distrik lain. Di Covalima, pada atau sekitar 27 Agustus, Damianus da Costa Nunes dan José Pereira, anggota kelompok milisi Laksaur di Fatumean, di bawah pimpinan Henrikus Mali, diduga membunuh Jaime da Costa Nunes, seorang aktivis prokemerdekaan yang dikenal. Keesokan harinya, José Pereira dan anggota lain dari kelompok milisi Laksaur datang ke rumah Jaime da Costa Nunes dan menunjukkan kepada istrinya sepasang telinga dan kemaluan manusia dan mengatakan kalau itu punya suaminya.⁹⁹⁷

819. Di Lautém, pada malam hari 27 Agustus, hari terakhir kampanye kelompok prokemerdekaan, sekelompok TNI dan anggota Tim Alfa menyerang kantor CNRT di Lospalos. Mereka menembaki rumah Verissimo Dias Quintas kemudian membakar rumah tersebut serta kantor CNRT. Sekitar 30 anggota CNRT berada di dalam areal kantor. Dalam serangan ini, Verissimo Dias Quintas diserang dengan golok dan tewas.⁹⁹⁸

820. Di Distrik Liquiça, pada 26 Agustus, seorang bernama Henrique dilaporkan dibunuh oleh empat orang anggota Kodim di Filita, Desa Lauhata (Bazartete). Pada hari yang sama dua orang pemuda dilaporkan dibunuh di Filita oleh anggota BMP, tetapi identitas mereka tidak diketahui.⁹⁹⁹

821. Komisi juga menerima laporan bahwa pada 27 Agustus, milisi Dadurus Merah Putih dan Halilintar, dengan hadirnya militer dan anggota kepolisian Indonesia, menyerang para juru kampanye di Desa Tapo Memo (Maliana, Bobonaro), dan membunuh empat orang; Raul dos Santos, Paulino, Felis Laku, dan Jaime.¹⁰⁰⁰ Seorang saksi dari salah satu pembunuhan ini bercerita:

Pada waktu itu kami didatangi oleh milisi Dadurus Merah Putih yang bernama M118 dan M119. Mereka melakukan operasi militer di Memo. Pada waktu itu suami saya bersembunyi di dalam rumah, namun diketahui oleh milisi M118. Suami saya langsung ditembak mati karena mereka mengira suami saya itu adalah Decker, salah seorang Komandan Falintil Kompi Selatan. Pada waktu ditembak pertama dia tidak meninggal dan lari jatuh di Sungai Uluhati, namun ditembak sekali lagi. Saya membawa ke rumah sakit Maliana. Namun sampai di rumah sakit dia langsung meninggal, dan pada saat itu juga milisi membakar rumah saya beserta isinya.¹⁰⁰¹

30 Agustus-Oktober: pembunuhan di luar hukum dan penghilangan setelah Jajak Pendapat

822. Hari pemungutan suara, pada 30 Agustus, umumnya berlangsung aman. Tetapi tetap ada beberapa pengecualian, seperti pembunuhan staf UNAMET di Ermera (lihat paragraf 824), dan kekerasan yang terus-menerus terjadi di beberapa distrik, antara lain Oecussi, Ermera, dan Manufahi.

823. Dari Oecussi, Komisi menerima sejumlah laporan mengenai penyerangan pada 30 Agustus, termasuk percobaan pembunuhan seorang laki-laki yang aktif dalam gerakan klandestin di Subdistrik Pante Makasar.¹⁰⁰² Komisi menerima beberapa pernyataan mengenai penyerangan oleh kelompok milisi Sakunar yang dipimpin oleh M120, M121, dan M112, terhadap Desa Bobometo pada 31 Agustus. Mereka membakar lebih daripada 100 rumah. Dalam serangan ini seorang pemimpin lokal yang bernama Horacio Tabes dilaporkan telah dibunuh dengan dipenggal kepalanya.¹⁰⁰³

824. Komisi juga menerima beberapa laporan pembunuhan oleh milisi Ablai terhadap dua orang laki-laki yang pulang dari pos pemungutan suara dekat Same (Manufahi). Tim Sasurut dan milisi Ablai, yang dipimpin oleh Bernadinho da Costa, menghentikan sekelompok orang yang sedang pulang setelah memberi suaranya di Holarua dan membawa mereka ke pos milisi di Datina, Holarua (Same, Manufahi). Mereka memisahkan Armindo da Costa dan Carlito da Costa, membawa mereka ke kebun kopi yang dekat, menyiksa mereka, dan memenggal kepala mereka.¹⁰⁰⁴

825. Dari Distrik Ermera, Komisi menerima kesaksian mengenai penghilangan seorang guru bernama Carlos dari Baboe Kraik (Atsabe). Dia dilaporkan ditahan di kantor desa Malabe dan dibawa pergi, dan tidak pernah dilihat lagi.¹⁰⁰⁵ Manuel Oliviera dibunuh oleh milisi Tim Pancasila dan anggota TNI di Atara.¹⁰⁰⁶ FO dari

Desa Lauala (Ermera) adalah aktivis prokemerdekaan lain. Pada 6 September dia ditangkap, kemudian dibawa ke pos Darah Integrasi dan kemudian ke sebuah rumah di mana diduga dia diperkosa oleh komandan milisi Naga Merah, M123, dan tiga anakbuahnya. Kemudian dia dibawa kembali ke pos milisi, di mana dia diancam oleh M123 dengan senapan otomatis. Dia diikat dengan tali, kemudian dieksekusi di Manten Nunutali, suatu lokasi di Lauala yang tidak berpenghuni.¹⁰⁰⁷

826. Pola menargetkan orang-orang yang dicurigai sebagai simpatisan prokemerdekaan, pemimpin CNRT, pelajar, dan staf UNAMET oleh TNI dan milisi berlanjut dalam skala yang jauh lebih besar setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat pada 4 September. Setelah sebagian besar komunitas internasional dievakuasi dan staf PBB yang tersisa terisolasi di perkantoran mereka di Dili, TNI dan milisi mulai beroperasi bersama secara terbuka, seperti yang mereka lakukan pada masa sebelum kedatangan UNAMET. Lebih jauh lagi, selama periode ini, pembunuhan-pembunuhan menjadi semakin tidak pandang bulu. Kekerasan tidak hanya ditargetkan kepada para aktivis prokemerdekaan, tetapi juga meluas ke keluarga dan teman mereka. Pekerja keagamaan dan pemimpin gereja juga menjadi sasaran penyerangan. TNI dan milisi menyerang dan membunuh pengungsi internal yang mencari perlindungan di gereja dan gedung-gedung pemerintah. Dalam beberapa kasus, seluruh pemuda laki-laki dalam suatu komunitas menjadi sasaran.

827. Kesaksian yang diterima oleh Komisi menunjukkan bahwa setidaknya 501 orang dilaporkan dibunuh atau dihilangkan pada periode setelah pemungutan suara. Laporan tentang pembunuhan di luar hukum dan penghilangan datang dari ke-13 distrik Timor-Leste. Ada juga 27 laporan mengenai pembunuhan atau penghilangan yang terjadi di Timor Barat (lihat Tabel 52 di atas). Sejumlah kasus berikut ini menggambarkan pola-pola kekerasan berbeda dalam periode ini, tetapi bukan merupakan catatan yang lengkap untuk seluruh korban kekerasan TNI dan milisi selama periode ini. Rangkuman dari kasus-kasus yang diketahui oleh Komisi dicantumkan di akhir bagian ini.

Staf UNAMET Timor yang menjadi sasaran

828. Pada hari pemungutan suara dan di hari-hari sesudahnya, staf UNAMET Timor Leste menjadi teramat rentan terhadap kekerasan oleh TNI dan milisi, ketika PBB dengan cepat menarik staf internasionalnya keluar dari distrik-distrik. Selama minggu terakhir kampanye dan pengumuman hasil Jajak Pendapat, empat pegawai UNAMET dieksekusi oleh milisi dan TNI.

829. Pada hari Jajak Pendapat, 30 Agustus, anggota TNI dan milisi Tim Pancasila menyerang pos pemungutan suara di Baboe Leten (Atsabe, Ermera). Kelompok tersebut, termasuk anggota TNI, M106, menyerang tiga staf UNAMET, yakni Orlando Gomes, João Lopes, dan Alvaro Lopes. Dua orang pertama langsung tewas, sedangkan yang ketiga selamat walaupun terluka parah. Orlando Gomes adalah wakil CNRT di desa itu. João Lopes diserang ketika dia membawa kotak suara ke kendaraan UNAMET yang menunggunya. Kejadian ini disaksikan oleh anggota TNI, Pedro dos Santos, dan oleh kepala desa Malabe, M125, dan seorang anggota

milisi, M126. M106 diduga terlibat dalam pembunuhan keduanya. Orlando Gomes dilaporkan ditusuk oleh M126, M125, dan M106.¹⁰⁰⁸

830. Tiga hari kemudian, pada 2 September, anggota TNI, antara lain Letnan M68 [dari Indonesia], Sersan M128, dan anggota Darah Merah Putih datang ke rumah seorang anggota staf UNAMET, Ruben Soares. Para anggota Darah Merah Putih masuk secara paksa ke rumah itu, menyeret Ruben Soares ke luar, dan menikamnya. Ruben Soares dipukul kepalanya dengan batu. Seorang anggota staf UNAMET yang lain, Domingos Pereira, keluar dari rumah sebelahnya dan dilaporkan ditembak oleh Sersan M128 dan juga ditusuk. Keduanya tewas karena luka-luka yang mereka alami.¹⁰⁰⁹

831. Pembunuhan EO dari Gleno menggambarkan tipe kekerasan yang dilakukan terhadap aktivis perempuan prokemerdekaan yang berani berbicara. EO adalah seorang guru sekolah dan sekretaris kelompok perempuan yang berafiliasi dengan CNRT, OMT (Organização de Mulheres Timorenses, Organisasi Perempuan Timor) di Ermera. Keluarganya adalah pendukung kemerdekaan yang cukup dikenal dan saudara lelakinya adalah komandan Falintil. Dia juga bekerja sebagai anggota staf UNAMET di Ermera. Seorang mantan anggota kelompok milisi Darah Merah bercerita kepada Komisi bahwa pada 13 September, komandan Darah Merah, M129, memerintahkan dia dan anggota milisi lain untuk membunuh EO. Kelompok milisi membawanya ke perbatasan di Tokoluli (Railaco, Ermera) dan di sana anggota milisi menikam dia sampai mati.¹⁰¹⁰ Sebelum dibunuh, EO ditahan di markas besar Darah Merah dan juga di sebuah rumah di mana dia diperlakukan sebagai budak. Seorang anggota TNI, M130, terlihat bersama EO di dalam sebuah truk.¹⁰¹¹ EO dilaporkan menceritakan kepada teman dekatnya bahwa dia diperkosa oleh anggota militer.¹⁰¹² Dua anggota TNI, M131 dan M132, juga diyakini terlibat dalam penganiayaan dan pembunuhan EO.¹⁰¹³

832. Menurut Submisi OHCHR kepada Komisi, paling tidak 14 staf UNAMET lokal dibunuh pada 1999: João Lopes, Ruben Barros Soares, Domingos Pereira, José Ernesto Jesus Maia, Orlando Gomes, Leonel Silva de Oliveira, Manuel de Oliveira, Mariano da Costa, EO, Carlos Maia, Abrui da Costa, Hilario Boavida da Silva, Francisco Taek, dan Paulos Kelo. Submisi tersebut mengatakan bahwa: "Tidak dapat ditentukan dengan tegas bahwa semua korban di atas dibunuh karena mereka staf UNAMET, namun sebagian besar memang dijadikan sasaran oleh karena tugas itu."¹⁰¹⁴

Penyerangan kediaman Uskup dan tempat pengungsian lain di Dili

833. Selain mengincar para individu yang terkait dengan Resistansi, TNI dan milisi juga menargetkan tempat-tempat pengungsian. Setelah pengumuman hasil pengambilan suara, karena kekerasan meningkat di seluruh wilayah, ribuan orang mengungsi ke gereja-gereja, di halaman gereja, dan terkadang di gedung polisi dan pemerintah, dengan harapan bisa mendapat perlindungan. Tetapi kenyataannya, TNI dan milisi justru menargetkan tempat-tempat ini. Contoh yang paling buruk adalah pembantaian di Gereja Suai pada 6 September 1999.

834. Di Dili pada 5 dan 6 September, kurang lebih sebanyak 15 orang tewas dibunuh atau hilang selama dan setelah penyerangan gabungan TNI dan milisi atas kompleks Dioses Dili (Camara Eclesiastica), kediaman Uskup Belo, Biara Kanosia, dan kantor Komite Palang Merah Internasional (ICRC).^{*} Sekitar siang hari pada 5 September, sekitar 50 orang milisi Aitarak bersenjata di bawah pimpinan M298, mulai menyerang kurang lebih 300 pengungsi di kompleks Dioses Dili. Mereka menghancurkan dan membakar gedung-gedung. Anggota TNI dan polisi dalam jumlah besar hadir dalam peristiwa ini tetapi tidak bertindak apapun untuk mencegah terjadinya penyerangan tersebut. Bahkan beberapa anggota TNI dan polisi ikut dalam penyerangan. Semua pengungsi dipaksa keluar dari kompleks dan menyeberang jalan ke pelabuhan Dili di mana mereka yang diduga sebagai pelajar, staf UNAMET, atau anggota CNRT dipisahkan dan diberikan perlakuan yang teramat kejam. Mereka memisahkan laki-laki dari perempuan dan anak-anak, kemudian membawa perempuan dan anak-anak ke markas Polda di Comoro, meninggalkan para laki-laki. Mereka diduga menyiksa delapan laki-laki yang dicurigai sebagai aktivis prokemerdekaan dan mencoba membawa mereka pergi dengan truk bak terbuka. Tetapi anggota polisi memerintahkan anggota milisi untuk membawa mereka ke rumah sakit militer Wirahusada. Sejumlah laki-laki yang keluar dari kompleks Dioses/Camara Eclesiastica Dili dibawa pergi dan kemudian hilang. Di antara korban adalah Cassiano Morais do Rego, Hilario Boavida, Lourenço Boavida, Jorge Masquita da Costa Régo, Mário Assunção da Costa Belo, Tomas da Costa Belo, Tiago Kofi, Alexandre Mesquita da Costa Rego, Virgilio Fernandes, Augusto da Costa, Marito Mesquita, José Martins de Sousa, Francisco Boavida, Eugenio da Costa dan Leonel da Silva de Oliveira. José Fernando [Nilton] da Costa juga salah satu yang dibawa ke luar Dioses Dili dengan mobil Kijang bak terbuka. Dia berhasil kabur tetapi karena tusukan yang dialaminya, dia meninggal di Klinik Motaél, 5 September.¹⁰¹⁵

835. Hari berikutnya, 6 September, penyerangan selanjutnya terjadi di tiga tempat pengungsian lain di Dili: Biara Kanosia, Kompleks Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan kediaman Uskup Belo. Sekitar 100 orang dan sembilan biarawati berlindung di Biara Kanosia. Di kompleks ICRC diperkirakan 2.000 orang telah berkumpul setelah pemungutan suara. Dengan menembakkan senjatanya dan berteriak, anggota milisi memaksa pengungsi keluar dari kompleks ICRC. Sekali lagi, yang dicurigai sebagai aktivis prokemerdekaan dipisahkan dari yang lain sebelum digiring menjauh dari tempat tersebut. Penyerangan yang paling sering dilaporkan dan didokumentasikan dari ketiga penyerangan adalah terhadap 5.000 pengungsi di kediaman Uskup Belo. Setidaknya 15 orang terluka parah, dan satu orang diketahui tewas dalam penyerangan. Komisi juga menerima informasi bahwa Vicente da Costa Carlos Tilman yang diketahui mengungsi ke

^{*} Menurut Pendakwaan Unit Kejahatan Berat 13/2003, Eurico Guterres dan Mateus de Carvalho bertanggung jawab atas pembunuhan sembilan orang dan penghilangan paksa enam orang lain pada atau sekitar 5 September berhubungan dengan penyerangan terhadap Dioses Dili. (Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Dakwaan terhadap Eurico Guterres, et al., Perkara No. 13/2003, VII, Tuntutan, A, No. 3-5)

kediaman Uskup Belo, hilang setelah penyerangan pada 6 September.¹⁰¹⁶ Mário Correia Fernandes dibawa dari Bidau Santana oleh empat orang yang mengenakan topeng setelah dia berhasil melarikan diri dari penyerangan di kediaman Uskup 6 September. Diapun kemudian hilang.¹⁰¹⁷

Pembantaian di Gereja Suai

836. Salah satu pembantaian yang paling buruk terjadi di Gereja Nossa Senhora do Rosario pada 6 September di Suai. Pembantaian ini adalah aksi pembunuhan massal yang direncanakan terhadap penduduk sipil yang tak bersenjata. Kejadian ini juga merupakan operasi yang dikoordinasikan antara TNI dan anggota milisi Laksaur, dan melibatkan pangkalan TNI, seperti kantor Koramil di Salele (Tilomar, Covalima) dan kantor Kodim di Suai.

837. Gereja Nossa Senhora do Rosario adalah tempat warga sipil dari seluruh subdistrik di Covalima mengungsi dari Januari sampai September 1999 karena anggota milisi Laksaur dan Mahidi serta TNI menyoroti mereka yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan.¹⁰¹⁸ Selama Jajak Pendapat, gereja ini menjadi fokus pelampiasan rasa permusuhan pihak pro-otonomi di daerah ini. Setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat, TNI dan anggota milisi meningkatkan ancamannya dengan menembakkan senjata mereka ke udara di sekitar gereja. Pada 5 September, Pastor Dewanto meminta komandan Polres, Letnan Kolonel Gatot Subyaktoro, untuk menjaga keamanan orang yang berlindung di kompleks gereja, ketika milisi memulai kampanye kekerasan di Kota Suai. Komisi menerima laporan yang mengatakan bahwa pada 4 dan 5 September, setidaknya lima orang dibunuh dan karena itu arus pengungsi ke kompleks gereja membengkak.¹⁰¹⁹ Komandan meyakinkan pastor bahwa dia akan mengatur keamanan bagi mereka. Pada hari yang sama, Pastor Hilario Madeira menyarankan masyarakat di kompleks gereja itu untuk mengungsi ke tempat lain karena gereja tidak lagi aman untuk mereka. Sekitar 500 orang meninggalkan gereja dan bersembunyi di hutan terdekat.

838. Pada pagi hari 6 September kelompok milisi Laksaur di bawah komando M78 dan M59 berkumpul di Koramil di Salele, yang juga merupakan markas milisi itu. Setelah kedatangan satu truk penuh anggota TNI, M78 memberitahu anakbuahnya bahwa mereka akan menyerang gereja Nossa Senhora do Rosario hari itu. Kelompok milisi di bawah M78 dan M59 pergi ke Kodim di Suai, kemudian ke rumah bupati, Kolonel M133 [orang Indonesia]. Sore itu, sekitar pukul 14.30, kelompok milisi meninggalkan rumah tersebut untuk berangkat ke Gereja Nossa Senhora do Rosario. M133 mengikuti mereka dari belakang, mengenakan seragam TNI dan membawa senapan.

839. Begitu tiba, milisi dan anggota TNI mengepung gereja itu. Penyerangan dimulai dengan dilemparkannya dua granat ke dalam kompleks gereja yang diikuti dengan penembakan. Kemudian milisi dan anggota TNI memasuki kompleks gereja dan menyerang masyarakat yang berlindung di sana. Mereka membunuh banyak penduduk sipil termasuk tiga pastor, Pastor Hilario Madeira, Pastor Tarsisius Dewanto, dan Pastor Francisco Soares.¹⁰²⁰ Antara 27 dan 200 orang dibunuh selama

penyerangan dan 30 lainnya pada pembunuhan bersasaran setelah penyerangan tersebut.[†] Komisi menerima banyak laporan eksekusi selama penyerangan, termasuk beberapa kasus pemerkosaan dan pembunuhan perempuan dan anak-anak.[†] Seorang saksi memberitahu kepada Komisi bahwa anggota milisi memenggal kepala dua orang, Benyamin dan Carlito dari Zumalai.¹⁰²¹ Saksi yang lain memberitahu kepada Komisi bahwa leher Jacinta Gusmão dibacok dengan parang.¹⁰²² Pastor Francisco Soares juga dilaporkan digorok di leher dan perutnya.¹⁰²³

840. Kolonel M133, Letnan M134 [orang Indonesia], M78, M59, M135 dan M136 [semua orang Timor] hadir di sana dan berpartisipasi dalam serangan tersebut. Seorang perempuan yang mengungsi di gereja bersaksi tentang koordinasi dekat antara penguasa sipil dan milisi dalam serangan itu:

Pada Maret 1999 seluruh keluarga saya meninggalkan rumah kami. Kami menyewa mikrolet yang membawa kami ke gereja Suai, karena seorang prajurit bernama Alfonso Mau (Prada di Kodim) sering datang dan memata-matai rumah kami.

Kami tinggal di gereja sampai Agustus.

Setelah pemungutan suara, kami kembali ke gereja. Pada tanggal 6 September, gereja diserang milisi. Suami saya telah lari ke hutan sehari sebelumnya. Saya di dalam kamar makan Pastor Hilario, dengan ibu mertua saya dan ipar perempuan saya. Terjadi penembakan sejak jam dua hingga tiga dini hari. Lalu Bupati M133 dan kepala desa [Desa Foholulik, Tilomar], M78, datang dan berkata, “Bunuh semua laki-laki saja, biarkan yang perempuan,” di depan kami semua.¹⁰²⁴

* Jumlah pasti korban mati dalam penyerangan ini tidak diketahui. Submisi OHCHR memberikan angka paling tidak 40. KPP HAM memberi perkiraan 50 orang dibunuh, sementara Yayasan HAK memberikan angka antara 50 sampai 200. Kurang-lebih 27 mayat ditemukan di perkuburan massal di Timor Barat pada atau sekitar 22 November 1999 di bawah pengarahannya KPP-HAM. (Lihat Dakwaan Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat terhadap Herman Sedyono, et al., paragraf 311.)

† M167 dan M168 pernah menembak mati 10 masyarakat sipil, termasuk seorang perempuan bernama Matilde yang hamil tujuh bulan, dengan akibat bayinya juga meninggal (Pernyataan HRVD 3624). Korban lain yang ditembak mati mencakup Eufrazia Gusmão Amaral, anak perempuan Mário Gusmão, (Pernyataan HRVD 7390), Paulus Seran (Pernyataan HRVD 3638), dan Patrício Mau dan Carlos Yosep (Pernyataan HRVD 8577). Miguel da Cruz de Conceição memberi kesaksian bahwa dua antara delapan temannya yang dibunuh dalam penyerangan tersebut, yakni Benyamin dan Alito dari Zumalai, dipenggal kepalanya (Pernyataan HRVD 6351). Seorang perempuan korban pemerkosaan di gereja kemudian meninggal dunia oleh karena pelanggaran itu. (Pernyataan HRVD 8459); Seorang perempuan lain kena tembakan namun tidak meninggal (Pernyataan HRVD 3637).

Feliciana Cardoso, saksi pembantaian di Gereja Suai¹⁰²⁵

Setelah keluarga saya ikut Jajak pendapat pada 30 Agustus 1999, kami langsung mengungsi ke gereja. Pada waktu itu, Suai dikuasai oleh sebuah kelompok gabungan, yakni milisi Laksaur dan Mahidi (Mati Hidup Integrasi), TNI, dan Kontingen Polisi Lorosae. Pada sore hari 6 September, gabungan milisi mulai menembak. Mereka menyerang rakyat yang berkumpul di sekolah SMA, dan membunuh banyak orang. Kemudian mereka menuju gereja. Jendela-jendela dipecahkan dan pintu dihancurkan. Kemudian mereka menyerbu gereja dan memerintahkan semua rakyat harus keluar dan menyerah. Sebagian di antara kami, termasuk saya dan ketiga anak saya, tetap tinggal dalam gereja. Sebagian lain keluar, termasuk suami saya. Para milisi mulai menembak orang yang keluar dari gereja. Saya tidak tahu bagaimana, tapi suami saya sempat kabur dan melarikan diri ke dalam kamarnya Pastor Hilario, di belakang gereja. Yang lain dimusnahkan oleh tim Laksaur/Mahidi...

Ketika milisi mulai membakar gereja, kami lari ke rumah pastor di samping gereja. Pada saat itu, saya sudah tidak bisa lihat suami saya. Saya melihat Pastor Francisco mengangkat tangannya, dengan mengatakan kepada milisi, "Cukup. Jangan menembak lagi. Kita semua orang Timor. Berhenti." Pastor teriak ketika dia melihat korban-korban yang sudah jatuh, namun milisi tidak perhatikan teriakannya. Kemudian seorang milisi, M137, dari Desa Raimea di Covalima, menuju Pastor Francisco. Milisi tersebut berpura-pura untuk peluk pastor, terus mengawal dia ke gua Bunda Maria. Sambil mereka kembali, M137 menembak pastor. Namun Pastor Francisco tidak meninggal langsung, dan begitulah M137 mengambil parang dan tikam Pastor Francisco di dadanya. Pada saat itu, pastor meninggal.

Saya melihat suami saya sedang lari dari kamar pastor ketika dia dengar bunyi tembakan. Emosinya tinggi sekali pada saat melihat pastor sudah ditembak. Ada sekelompok milisi di luar gereja, [termasuk] M138 dan M139, yang membawa senjata—AR-16, SKS, dan parang. Mereka mulai menembak ke arah suami saya, tapi senjatanya tidak meletus. Salah satu anggota milisi menanya suami saya, "Kenapa tidak lari?" Suami saya jawab, "Saya seorang laki-laki! Biar saya ditembak di tanah saya sendiri! Viva Xanana Gusmão! Viva Timor Leste!" Kemudian M139 angkat parangnya dan tusuk suami saya di pinggul kirinya, dan parang itu keluar pada sebelah kanan. Dia juga membacok bahu kirinya, kaki kirinya dan tangan kanannya, dua kali. Sekitar pukul 16.00 suami saya menarik napas terakhir.

Siapa yang masih selamat diperintah keluar [dari gereja]. Kami didorong, ditendang dengan bot, diinjak, dan dipukul. Mereka mengarahkan senapan dan parang kepada kami sepanjang jalan dari gereja ke kantor Kodim 1635...Banyak orang berada di Kodim, termasuk istri ketua zona [CNRT] Zumalai (Covalima), yang bernama Domingas, dengan anak perempuannya, Zulmira, Fatima, Agustinha, Cinta, dan Monica...Selama kami berada di Kodim kami dihina, diejek, dan dikasih makan sisa-sisaan. Saya bersama perempuan yang lain tidak makan, karena kami takut diracun. Pada 13 September 1999...Kasdim memerintah kami harus dipindahkan ke Betun [Timor Barat] dengan empat buah truk... Tapi di persimpangan jalan di Camenasa (Suai, Covalima) kami ditinggalkan di pinggir jalan.

Pada 14 September 1999, sekitar pukul 19.00, seorang anggota Laksaur, orang Timor, M169, mengambil anak perempuan satu yang ada bersama saya pada waktu itu. Anak gadis tersebut dipaksa naikkan dalam satu jip, dan dibawa pergi. Pada malam yang sama pada pukul 19.30 saya bersama teman satu melanjutkan jalan, dibantu oleh seorang Mahidi yang kami kenal...Dia membawa kami jalan kaki ke Betun. Kami dikawal oleh dua polisi dengan motor. Perjalanan kami dari Camenasa sampai ke Betun makan waktu delapan jam. Kami tiba pada 15 September pada jam 10. [Sambil kami tiba] anak gadis itu dibawa kembali oleh anggota milisi Laksaur M169, dengan motor. Ketika anak itu turun dari motor dia tidak bisa jalan karena diperkosa. Dia datang dengan luka-lukaan dan darah pada kelaminnya. Saya mengobati dia...saya masak air dengan daun sirih, dan kasih dia minum. Saya mandikan dia dengan air sirih itu.

Kami diperintah harus lapor diri kami di Komando Militer Betun. Kami tinggal di kantor polisi Betun selama dua bulan. Selama di sana kami tidak pernah rasa aman karena kami diteror terus oleh milisi. Keinginan kami untuk pulang makin kuat ketika kami dengar bahwa sebagian pengungsi sudah kembali ke Suai. Kami melarikan diri diam-diam, dan kembali ke Suai pada 11 November 1999.

Mencari perlindungan polisi: pembunuhan di kantor polisi Maliana

841. Dalam beberapa kasus, individu-individu atau bahkan komunitas secara keseluruhan meminta perlindungan dari polisi, yang menurut ketentuan dalam Kesepakatan 5 Mei bertanggung jawab atas keamanan, sebuah fakta yang telah menjadi bagian utama dari kampanye penyuluhan UNAMET pada masa menjelang pemungutan suara. Terkadang memang ada polisi yang berupaya memberi perlindungan kepada orang Timor-Leste secara perorangan. Sebagai contoh, seorang anggota Brimob yang bersimpati di Gleno, Ermera, beberapa kali mencoba

menyembunyikan anggota staf UNAMET EO dari milisi walaupun akhirnya EO ditangkap, diperkosa, dan dibunuh.¹⁰²⁶ Dalam sebagian besar kasus, polisi Indonesia samasekali gagal untuk mencegah terjadinya kekerasan. Terdapat beberapa kasus ketika justru mereka yang menjadi sasaran kekerasan ketika sedang mencoba untuk mencegah kekerasan. Sebagai contoh, pada 6 September, seorang petugas polisi, Bernabe de Jesus di Hatupal (Maubisse, Ainaro) ditembak mati oleh milisi dan TNI dari Koramil Maubisse setelah dia mencoba mencegah milisi menjarah dan membakar desa tersebut.¹⁰²⁷

842. Kerja sama antara TNI dan milisi, serta keterlibatan polisi Indonesia, digambarkan secara jelas oleh kejadian di Kantor Polres di Maliana, Bobonaro, di mana banyak penduduk sipil mencari perlindungan dari kekerasan setelah pemungutan suara.

843. Pada 8 September TNI dan kelompok milisi melancarkan pembunuhan sistematis terhadap orang-orang yang diduga sebagai pendukung kemerdekaan yang berkumpul di kompleks Polres Maliana. Mereka membunuh paling tidak 13 orang, termasuk seorang anak lelaki berumur 12 tahun. Keesokan harinya TNI dan kelompok milisi memburu mereka yang berhasil kabur dari Polres Maliana dan membunuh paling tidak 13 orang lagi. Pembunuhan pada 8 dan 9 September dapat dianggap sebagai puncak dari operasi yang sistematis dan terkoordinasi secara baik oleh TNI dan milisi selama bulan-bulan terakhir untuk menghilangkan pendukung kemerdekaan di Maliana. Tanpa kehadiran wakil internasional di daerah tersebut, pejabat militer dapat secara terbuka terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan orang-orang yang dianggap sebagai musuh mereka. Berikut ini adalah kutipan dari pendakwaan yang diajukan oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat pada 10 Juli 2003.¹⁰²⁸

844. Daftar orang-orang yang berlindung di kompleks Polres dipersiapkan. Pada sebuah pertemuan 6 September di kompleks tersebut, yang antara lain dihadiri oleh komandan Polres Mayor (Pol.) Budi Susilo; Komandan Kodim, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; bupati, Guilherme dos Santos; kepala intelijen Kodim, Letnan Sutrisno; Komandan Halilintar, João Tavares; ketua DPRD dan cabang distrik FPDK (Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan), Jorge Tavares; pemimpin DMP di Ritabou dan wakil ketua distrik FPDK, Natalino Monteiro Gonçalves; dan komandan milisi DMP di Maliana, Marcos Tato Mali. Setelah pertemuan tersebut, para pengungsi yang ketika itu tinggal di tenda-tenda di sekitar kompleks, diperintahkan berkumpul di belakang kompleks.

845. Pada sore hari 8 September anggota TNI dari unit-unit memberi *briefing* kepada unit-unit Dadurus Merah Putih di bawah komando mereka di tempat-tempat dan sekitar kota Maliana termasuk desa Holsa, Lahomea, dan Ritabou. Pada sebuah pertemuan di Ritabou, seorang anggota SGI bernama M140 [orang Indonesia] memberi milisi daftar nama dan menyuruh mereka pergi ke Polres, untuk menemukan orang yang berada di daftar dan membunuh mereka. Seluruh milisi yang mengambil bagian dalam operasi ini kemudian bertemu di Koramil Maliana di mana beberapa anggota TNI termasuk Letnan M68 [orang Indonesia] juga hadir.

Sersan M141 [orang Timor] memerintahkan para anggota Dadurus Merah Putih untuk membagi diri menjadi beberapa kelompok. Sedikit lewat pukul 17.00, Sersan M141 memberikan setiap kelompok tugas yang spesifik seperti menemukan dan membunuh pendukung kemerdekaan yang diidentifikasi, juga membentuk pagar betis malam itu di sekitar kompleks untuk mencegah pengungsi melarikan diri.

846. Penyerangan dimulai dan berlangsung selama tiga setengah jam. Tiga belas orang yang dibunuh dalam penyerangan itu adalah Manuel Barros, Julio Barros, Domingos Gonçalves Pereira, José da Costa Guterres, José Abel, Francisco Paixão Fatima Martins, Martinho Marques, José Barros Soares, Lorenzo dos Santos Gomes, Joaquim Monteiro Gonçalves, José Moniz da Cunha, Damião da Cruz, dan Daniel Barreto. Manuel Barros adalah anggota DPRD tingkat II dan seorang pemimpin CNRT. Julio Barros adalah mantan camat Maliana. Domingos Gonçalves Pereira adalah Kepala Desa Ritabou. José Barros Soares baru berusia 12 tahun dan dibunuh mungkin karena dia adalah anak pemimpin CNRT Augustinho Soares. Selama penyerangan Letnan M68 [orang Indonesia] dan sersan TNI M75, M142, M141, M143, M97, dan M144 memberi perintah kepada milisi.

847. Pembuangan mayat-mayat orang yang dibunuh dilaksanakan dengan koordinasi dengan kelompok milisi di Batugade, Saka Loromonu, di bawah komando M145, Komandan Saka Loromonu, dan wakilnya, M148. Mayat-mayat ini dibawa ke pantai dekat benteng Portugis lama di Batugade.¹⁰²⁹ Kemudian di bawah komando Sersan M141 [orang Timor], anggota SGI M140 [orang Indonesia], dan kedua komandan Saka Loromonu, mayat-mayat ini diikatkan ke karung-karung yang diisi pasir, diangkut ke dalam perahu nelayan, kemudian dibawa ke tengah laut dan dibuang.

848. Selanjutnya, menurut Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, pada 9 September Sersan M147 [orang Timor], yang berada di rumah Natalino Monteiro Gonçalves di Desa Ritabou menerima informasi dari penduduk desa bahwa sekelompok orang yang telah melarikan diri dari kompleks Polres telah ditemui di tepi sungai dekat Desa Mulau,^{*} sekitar 2 km dari Ritabou. Sersan M147 kemudian memerintahkan sekelompok milisi Dadurus Merah Putih untuk mengikuti dia ke Mulau. Dalam operasi ini, 13 orang pendukung prokemerdekaan dibunuh. Para korban adalah: Lamberto de Sá Benevides, Abilio Marques Vicente, Augusto dos Santos Marques, José Barreto, Pedro Luis, Lucas dos Santos, Luis Soares (Luis dos Santos), Jeroni Lopes[†], Domingos Titi Mau, Manuel Magalhães, Carlos Maia, Ernesto da Coli, dan Paul da Silva. Sembilan orang pertama dari mereka, dari Lamberto de Sá Benevides sampai Domingos Titi Mau, diperintahkan oleh Sersan M147 untuk berlutut dan mengangkat tangan mereka. Sersan M147 kemudian menembak mereka satu per satu dengan senapan otomatis. Keempat korban lain ditangkap dan dibunuh sendiri-sendiri. Carlos Maia ditikam sampai mati, dan Paul da Silva ditembak mati sementara mencoba menyerah. Manuel Magalhães adalah

* Dalam Pendakwaan Wakil Jaksa Penuntut Umum, Mulau disebut sebagai sebuah desa, namun sebetulnya bukan merupakan desa, dan bukan pula kampung,

† Menurut Pernyataan HRVD 2587, nama lengkap Jeroni adalah Jeronimo Lopes.

pemimpin CNRT dan Carlos Maia seorang aktivis prokemerdekaan terkemuka. Seluruh jenazah, kecuali jenazah Paul da Silva, dibawa ke pantai di Batugade. Atas perintah dua komandan Saka Loromonu, jenazah dibuang ke laut. Jenazah Paul da Silva ditemukan di daerah Mulau pada September 1999 dan dikubur. Jenazah Carlos Maia dan Lamberto de Sá Benevides ditemukan di Pantai Batugade dan dikubur.¹⁰³⁰ Sehari setelah pembunuhan di Mulau, 10 September, dua orang polisi Timor, Filomeno Guterres dan Martinho Lopes Amaral, dibunuh 150 meter dari pinggir sungai dengan cara yang sama, karena dicurigai sebagai simpatisan CNRT.¹⁰³¹

Eksekusi di kantor polisi Maliana

Berikut ini adalah kutipan dari cerita dua orang saksi mata yang menyaksikan pembunuhan di pos polisi Maliana; dua-duanya menggambarkan kegagalan polisi Indonesia mencegah pembunuhan tersebut. Yang pertama adalah kesaksian seorang perempuan yang kehilangan enam anggota keluarganya dalam 24 jam, termasuk tiga adiknya dan suaminya, yang sebagian dibunuh di pos polisi tersebut atau diburu sampai ke Mulau dekat Desa Ritabou:

Kami ke Polres pada 3 September 1999. Kami keluar dari rumah tidak membawa apa-apa. Kami sampai di sana, situasi di dalam Polres normal seperti biasa, namun beberapa anggota Polri yang dicurigai, senjatanya diambil/dilucuti oleh atasan mereka. Pada 4 September 1999, kami berkumpul dan mendengar hasil Jajak Pendapat yang diumumkan UNAMET. Pada sore harinya beberapa orang milisi datang di tempat kami, karena tempat kami paling banyak pemuda. Mereka bertanya kepada kami: "Mengapa kalian mengungsi ke polisi saja?" Kami semua diam. Salah satu adik laki-laki mau menjawab, tetapi diam juga. Beberapa saat kemudian dia bertanya kepada kami: "Apakah kalian takut mati?" Lalu kami semua diam...

Sore hari tanggal 8 September 1999, lewat jam lima...milisi mulai beraksi di beberapa tempat di kompleks Polres. Saya dengar suara dekat bagian kami yang mengatakan: "Polisi diam, kami yang berhak bertindak." Lalu mereka mulai menyerang dari segala penjuru. Banyak milisi masuk dekat bagian kami berada. Tidak lama kemudian, saya dengar suara teriakan seorang laki-laki: "Ai, saya mati." Setelah itu saya melihat empat orang milisi menarik mayat lewat di depan saya. Jarak antara dua dan tiga meter, dekat sekali. Sekalipun ada pagar bunga di tengah, namun tampaknya dekat sekali, persis di samping saya...Di depan saya ada lima mayat, sampai keadaan gelap baru saya tidak kenal lagi, namun salah satu di antaranya pakai celana pendek, jaket hitam, dan berbadan gemuk. Ketika mereka menarik mayat itu, saya semakin mendekatkan diri pada tanaman bunga, untuk melihat yang lebih jelas lagi. Dekat dinding sebuah rumah, orang itu masih

hidup dan berteriak. Mereka menginjak orang itu. Setiap kali mereka menarik mayat mesti milisinya empat-empat, bukan satu orang. Beginilah cara menarik mayat di Polres Maliana.

Tidak ada tindakan dari Kontingen Loro Sa'e waktu itu. Setelah melihat adegan pembunuhan mereka masuk dalam kantor dan berpangku tangan dan bahu. Mereka berada di sebelah kami, tetapi tidak buat apa-apa. Mereka menutup pintu kantor, ketika melihat masyarakat lari ke sana minta perlindungan. Tidak mengizinkan masuk. Oleh karena itu, saya melihat masyarakat berkumpul di pintu masuk Kontingen Loro Sa'e. Pintu mereka ditutup.¹⁰³²

Di antara orang-orang yang diincar adalah tokoh prokemerdekaan terkemuka Manuel Barros, mantan ketua fraksi PDIP di DPRD tingkat II, yang mencari perlindungan di pos polisi tersebut bersama keluarganya, termasuk saudaranya Julio Barros, mantan camat Maliana, pada 2 September. Setidaknya ada empat orang yang melihat bagaimana dia dibunuh, termasuk seorang laki-laki yang berada hanya beberapa meter ketika ini terjadi. Tak lama kemudian Manuel Barros pun dibunuh. Keduanya memohon kepada polisi Indonesia dari Kontingen Loro Sa'e untuk mencegah, namun mereka tidak berbuat apa-apa:

Saya bersama seorang teman, merasa panik dan beberapa saat kemudian bertemu dengan Bapak Manuel Barros. Saya dengan beliau lari ke Kontingen Loro Sa'e untuk meminta pertolongan. Ketika kami masuk di kantor Kontingen Loro Sa'e, masyarakat juga ikut kami berdua...Saya berhasil masuk ke dalam kantor, namun saya diusir keluar dan mereka berteriak: "Keluar dari sini, keluar dari sini, ini bukan tempat kalian untuk sembunyi, kalau Anda tidak mau keluar, kami akan menembak." Masyarakat di lingkungan Polres menaruh harapan pada pasukan Kontingen Loro Sa'e, karena merekalah yang mendapat mandat dari PBB untuk mengamankan situasi di Timor Leste pada saat itu.

Masyarakat yang berhasil masuk ke dalam kantor mereka, diusir keluar. Pak Manuel Barros lebih dulu keluar dan saya mengikutinya. Pada saat kami berdua masih berdiri dekat sebuah dinding tembok, kami melihat milisi menarik mayat Domingos Pereira, almarhum berpangkat koptu dan menjabat kepala desa Ritabou, kecamatan Maliana. Saudara Manuel Barros kaget dengan kejadian itu dan langsung lari. Kami masing-masing lari ke tendanya. Pak Manuel Barros ketika sampai di tendanya, langsung ditusuk dengan samurai oleh milisi Dadurus Merah Putih dan mati seketika. Inilah kata-kata beliau yang diucapkan terakhir kali: "Ai Maromak, hau kala mate tebes ona." [Ai Tuhan, saya memang akan mati] Melihat keadaan demikian sayapun tidak dapat bergerak. Saudari saya bernama Natalia Verdial menarik saya dan masukkan dalam kasur dan mereka tidur di atas kasur itu. Saya berada di tempat itu sampai larut malam.¹⁰³³

Institusi: Gereja dan pemuka agama menjadi sasaran

849. Sementara sebelum Jajak Pendapat para rohaniwan menjadi sasaran intimidasi militer Indonesia dan milisi, setelah pemungutan suara mereka menjadi sebagian korban pembunuhan yang paling brutal. Selain pembunuhan Pastor Hilario Madeira, Pastor Francisco Soares, dan Pastor Tarsisius Dewanto di Gereja Suai, rohaniwan di wilayah lain negeri juga menjadi sasaran penyerangan. Di Dili 11 September, pastor Jerman/Indonesia, Carolus Albrecht, direktur Jesuit Refugee Service di Timor-Leste ditembak di rumahnya.¹⁰³⁴ Dalam salah satu kejadian paling kejam di masa pasca Jajak Pendapat, lima rohaniwan dan empat anggota gereja lainnya disergap dan dibunuh oleh sekelompok milisi Tim Alfa di dekat Lospalos.

850. Pembunuhan sembilan orang oleh anggota Tim Alfa yang dipimpin oleh Joni Marques pada 25 September, di jalan dari Lautém menuju Baucau, dekat Sungai Verokoco,^{*} merupakan kejadian dengan penghilangan jiwa yang tertinggi antara semua kejadian di Distrik Lautém setelah pemungutan suara 1999. Para korban termasuk lima orang rohaniwan, yakni Suster Erminia Cazzaniga, Suster Celeste de Carvalho, Frater Jacinto Xavier, Frater Fernando dos Santos, dan Seminaris Valerio da Conceicao. Korban lainnya juga termasuk wartawan Indonesia Agus Mulyawan dan Cristovão Rudy Barreto dan Titi Sandra Lopes yang naik kendaraan yang sama dengan para rohaniwan tersebut. Izinho Freitas Amaral ditangkap secara terpisah di lokasi yang sama oleh kelompok milisi dan dibunuh dengan delapan korban yang lain. Suster Erminia dilaporkan dibunuh ketika dia sedang berlutut untuk berdoa. Pemimpin kelompok tersebut, Joni Marques, mengatakan bahwa dia diberitahu bahwa pemuka agama Katolik juga adalah pendukung kemerdekaan, karena itu harus dimusnahkan.[†]

Pembunuhan dan penghilangan selama penarikan mundur Batalion 745

851. Walaupun pasukan militer Indonesia yang ditempatkan di seluruh negeri ini bertanggung jawab atas pembunuhan dan penghilangan di lokasi-lokasi tertentu, ada juga kasus-kasus di mana suatu unit atau sekelompok unit militer melakukan pembunuhan di beberapa lokasi. Komisi diberitahu bahwa para anggota Batalion 745, di bawah komando Mayor 148 [orang Indonesia], selain bertanggung jawab atas beberapa pembunuhan di wilayah Lospalos setelah pemungutan suara,[‡] juga

* Pendakwaan Jaksa Penuntut Umum dari UNTAET mencatat: "Pada sekitar pukul 16.00, kendaraan bus mini melewati persimpangan jalan Lautém dan menuju daerah Desa Verokoco. Jalan tersebut berpinggiran Sungai Malailana." (Perkara No. 09/2000, paragraf 36). Tidak ada desa yang bernama Verokoco, tapi ada sungai dengan nama itu.

† Pernyataan HRVD 2285. Penuntut Umum UNTAET, Dakwaan terhadap Joni Marques, et al., Perkara No. 09/2000/, para. 33-40. Panel Istimewa untuk Kejahatan Berat, Keputusan, 11 Desember 2001. Tujuh anggota milisi, termasuk Joni Marques, diputuskan bersalah oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

‡ Menurut Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, p. 240, Batalion 745 bertanggung jawab atas pembunuhan 10 orang antara 8 dan 13 September di Distrik Lautém. Hanya dua Pernyataan HRVD dalam *database* CAVR menunjukkan pertanggungjawaban secara langsung kepada Batalion 745 untuk periode ini: Pernyataan HRVD 8747 (pada 10 September Jaime dan Marito ditangkap dan dibawa ke markas 745

bertanggung jawab atas pembunuhan paling tidak 18 orang di Distrik Baucau, Manatuto, dan Dili, selama penarikan batalion ini ke Timor Barat pada akhir September.

852. Pada 20 September, sekitar 120 anggota Batalion 745 bersama tentara Kodim di Lautém membentuk konvoi untuk mengawal kendaraan militer sepanjang jalan pantai ke Timor Barat. Saksi-saksi memberi keterangan di depan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Dili bahwa sebelum konvoi berangkat meninggalkan Kota Lautém, tentara dari Batalion 745, dengan kehadiran Mayor M148 [orang Indonesia] dan Komandan Peleton Letnan M149 [orang Timor], menahan, menembak, dan membakar mayat tiga orang laki-laki—Amilicar Barros, João Gomes, dan Augusto Venacio Soares—dekat gudang beras.¹⁰³⁵

853. Ketika konvoi ini melewati Laga di Baucau, beberapa rumah dihancurkan. Dua pemuda dibunuh pada 21 September dekat Desa Buile (Baucau, Baucau) di jalan dari Laga menuju Baucau' oleh tentara dari Batalion 745. Empat korban lain, termasuk dua perempuan, dibunuh ketika konvoi melalui Buruma dan Caibada di kota Baucau.¹⁰³⁶ Selain itu, dilaporkan bahwa tentara dari batalion yang sama membunuh empat orang laki-laki di Laleia di Distrik Manatuto, dan menahan tiga orang lain tidak jauh dari sana, dan orang-orang itu tidak pernah dilihat lagi.¹⁰³⁷

854. Pada 21 September Batalion 745 tiba di Becora di pinggir Dili. Di situ sebuah mobil yang sedang jalan, dikemudikan oleh seorang supir dari Timor-Leste, dipaksa berhenti. Mobil itu berpenumpang seorang wartawan Inggris, seorang fotografer Amerika Serikat [identitas kedua wartawan ini tidak diketahui], dan seorang penerjemah dari Timor-Leste. Sancho Ramos de Ressuricão, pengemudi mobil itu, dihantam kepalanya dengan popor senapan sehingga bola matanya keluar dari kepalanya. Penerjemah Anacleto da Silva dibawa pergi dan tidak pernah dilihat kembali. Ketika konvoi melanjutkan perjalanan ke jalan Becora, anggota Batalion menembaki tiga orang laki-laki yang berjalan di pinggir jalan, melukai satu dan membunuh satu, Manuel Andreas. Seorang wartawan Belanda, yang baru tiba di Dili sore itu untuk melaporkan tentang kedatangan Interfet kepada Financial Times, Sander Thoenes, juga dibunuh oleh tentara dari Batalion 745. Pengemudi motor [orang Timor] yang diboncengi oleh Sander Thoenes mencoba memutar arah untuk melarikan diri tapi diberhentikan oleh tentara. Pengendara motor itu berhasil melarikan diri tapi Sander Thoenes ditembak oleh salah satu dari dua tentara, termasuk Letnan Camilo dos Santos.¹⁰³⁸ Kedua telinganya dipotong dan sebagian wajahnya dikuliti.¹⁰³⁹

di Desa Fuiloro, dan tidak pernah dilihat lagi) dan Pernyataan HRVD 8742 (empat orang dibunuh oleh para anggota Batalion 745 pada 12 September setelah tentara tersebut membakar rumah masyarakat di Kampung Kanto, Desa Fuiloro). Pernyataan HRVD lain yang melaporkan pembunuhan dan penghilangan di Lautém antara 4 dan 20 September adalah: 3941; 7626; 2261; 7620; 8734; 8747; 7622; 8738; 8742; 8743; 8752; dan 2255.

* Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Timor-Leste (Kasus 10/2002) menyebut Desa Buile (Laga, Baucau)

855. Konvoi tersebut kemudian melanjutkan perjalanan ke markas besar Korem di pusat Dili, kemudian ke Kota Balibó, dan sampai di Kupang pada 22 September. Walaupun Mayor M148 dan dua perwira lain kemudian diperiksa oleh polisi militer, belum ada perwira TNI yang dihukum atau didisiplinkan berhubungan dengan pembunuhan-pembunuhan di atas, sampai sekarang, Agustus 2005.¹⁰⁴⁰

Komunitas yang menjadi sasaran: pembunuhan di Mau-Nunu, Passabe, dan Maquelab

856. Sebagaimana dibahas di atas, pembunuhan oleh TNI dan milisi menjadi semakin tidak pandang bulu, dan mulai menargetkan masyarakat seluruhnya di suatu tempat, atau sebagian masyarakat setempat. Kekerasan juga ditujukan kepada para rohaniwan, anggota keluarga CNRT, dan bahkan anggota kepolisian Indonesia yang mencoba membantu korban. Selama September dan Oktober, berbagai komunitas secara keseluruhan juga menjadi sasaran karena dianggap sebagai simpatisan prokemerdekaan, karena tokoh-tokoh klandestin pernah tinggal di sana, atau karena Falintil diketahui pernah aktif di daerah mereka.

857. Sebagai contoh, setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat di Ainaro, TNI dan milisi Mahidi dipimpin oleh M81 dan adiknya, M151, membunuh atau menghilangkan lebih daripada 20 orang,^{*} yang memuncak dengan serangan brutal terhadap warga sipil di Desa Mau-Nuno. Serangan tersebut dilakukan pada 23 September, setelah Interfet sampai di Dili. Milisi yang terlibat pada penyerangan ini sebelumnya telah lari ke Atambua, namun kemudian kembali lagi untuk menyerang Mau-Nuno, mengumpulkan penduduk dan secara paksa membawa mereka ke Timor Barat.¹⁰⁴¹ Pagi hari 23 September sekitar 60 orang Timor, sebagian besar anggota milisi Mahidi, dan setidaknya dua tentara Indonesia, menyerang desa Mau-Nuno. Di dalam kelompok milisi ini dilaporkan ada M152, M153, dan M154. Setelah masuk Mau-Nuno dari beberapa arah, milisi mulai menembak senjata ke udara dan memerintahkan penduduk keluar dari rumah untuk dideportasi ke Timor Barat. Beberapa milisi membawa kaleng-kaleng bensin dan mulai membakar rumah dan membunuh ternak.

858. Menurut wawancara dengan para saksi mata, pernyataan yang diserahkan kepada Komisi dan tuduhan di dalam dakwaan yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat di Dili, milisi Mahidi membunuh paling

* Semua angka dikurung mengacu ke nomor Pernyataan HRVD: Jonino Gomes dibunuh di Ainaro oleh Mahidi (3321); Moises ditangkap oleh milisi Mahidi dan dibawa ke pos Mahidi di Beikala. Pada 4 September dia dibawa pergi oleh milisi Ablai, dan tidak pernah dilihat lagi.(1312); Felix de Araújo dibunuh di Mulo 4/9 oleh TNI (7408); Fernando Gomes dibunuh di Cassa pada 4/9 oleh Mahidi (7414); Domingos Guro dibunuh oleh TNI Kodim Ainaro dan Mahidi di Beikala pada 6/9 (1375; 1308; 1329; 1373; 1374); Bernabe de Jesus dibunuh di Maubisse oleh TNI pada 6 September (5965; 5955); Avelino Magno dibunuh oleh Mahidi di Ainaro pada 9 September (3336); Moises dan Octavio dibunuh oleh Mahidi pada 12 September di Hato Udo (2002); Carlito, Lucio da Costa, Henrique dibunuh di Aituto pada 9 September (7416); Constancio Araújo dibunuh di Leolima pada 12 September (2017); Paulino Maria Bianco oleh Mahidi di Cassa pada 12 September (2676; 2731; 2008); Americo Soares oleh TNI di Ainaro (3362); Sancho oleh Mahidi dan TNI di Ainaro pada 16 September (9118); Ramiro dan José Guterres di Ainaro oleh Mahidi pada 17 September (3359), dan tiga pemuda di Beikala oleh TNI Batalion 301 pada 19 September (1399).

tidak 13 orang dalam penyerangan itu, termasuk perempuan dan anak-anak. Satu keluarga berhasil melarikan diri dari penyerangan dengan bersembunyi di sungai dangkal yang menuju punggung bukit di belakang Mau Nuno. Seorang perempuan muda, Francisca Maria Almeida, dan anak lelakinya yang berumur dua tahun, Isadoro, bersembunyi di sana bersama orang tuanya, Ernestina dan Francisco Bianco, dan kakak iparnya, Isabel Maria Almeida. Mereka bersembunyi di sebuah lubang di tanah di dekat sungai kecil di bawah bukit. Ketika beberapa anggota milisi Mahidi dari Cassa (Ainaro, Ainaro) menemukan mereka, milisi tersebut menembak mati Ernestina dan Francisco Bianco, dan Isabel Maria Almeida. Ketika Francisca Maria Almeida ditembak, peluru menembus badannya dan mengenai anaknya, Isadoro, yang berusia dua tahun. Anak itu ditembak kepalanya juga, sehingga mati. Seorang wanita lain dan anak perempuannya yang masih kecil dan bersembunyi di dekat sana, juga ditembak dan terluka. Korban lain yang dibunuh di Mau Nuno adalah: Armando, Jacob Bianco, Lobotina, Jorge Correia Barros Xavier, João Nunes, Lucinda da Silva Bianco, Afonso Ramos, Miguel Monis, dan Alcino Araújo. Sebanyak 75 orang dipaksa pindah ke Cassa, kemudian dideportasi ke Atambua, Timor Barat.*¹⁰⁴²

859. Dalam submisi yang diberi kepada Komisi pada Juli 2004, Regina Bianco menceritakan pembunuhan ibunya, Belinha da Silva Bianco Lopes:

Mula tanggal 23 September 1999, saya dan ibu berada di rumah. Tiba-tiba para milisi dari kelompok Mahidi masuk di rumah saya di Mau-Nuno seperti: M138, M155, M158, M159, M161, dan M164, dengan memakai kaos oblong bertulisan Mahidi, bersenjata lengkap merek SKS, dan granat dan samurai. Mereka masuk di rumah saya dan merusak semua barang-barang di dalam rumah, lalu dibawa keluar untuk kemudian dibakar semua.

Setelah itu [mereka] memaksa orang di kampung itu harus mengungsi dengan mereka ke Betung [sic] Atambua. Para penduduk pun terpaksa mengikuti mereka tanpa membawa barang-barang karena takut akan dibunuh. Kami jalan menyeberangi sungai tanpa makan atau istirahat. Kemudian empat orang milisi mengambil granat di saku masing-masing dan akan melempar ke arah penduduk sehingga membuat para penduduk kaget dan berlutut meminta tolong agar jangan dibunuh. Namun para milisi tidak menghiraukan dan malah para milisi menyatakan, “Kalau perlu tembak saja.”

Sebagian besar milisi ada hubungan saudara karena mereka semua berasal dari kampung kami. Para milisi juga mengenal ibu kandung saya sehingga para milisi langsung menyebut nama ayah kandung saya. Ibu saya langsung menjawab mereka, “Di mana surat suami saya? Tunjukkan kepada saya agar saya juga dapat membacanya.” Dan milisi menjawab, “Tidak akan pernah kami menyerahkan surat tersebut

* Pendakwaan Wakil Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan nama Armando atau Lobotina, dan Lucinda da Silva Bianco disebut sebagai Lucia da Silva.

kepada kamu.” Setelah itu para milisi menyuruh para penduduk untuk jalan lebih dulu untuk menunggu mobil ke Atambua. Ibu saya sedang jalan di belakang kelompok rakyat desa kami, dan ditembak mati oleh milisi M138, dekat Sungai Bui-Liku. Mama saya langsung mati di tempat, dan M322 memaksa saya naik mobil ke Betung sendiri. Milisi M322 masih keluarga dengan ayah kandung saya.¹⁰⁴³

Pembunuhan massal di Passabe dan Maquelab, Oecussi

860. Pembunuhan yang terjadi di Maquelab dan Passabe dekat perbatasan Indonesia di Oecussi juga menggambarkan seberapa jauh tindakan yang bisa dilakukan TNI dan milisi demi menghukum komunitas secara keseluruhan karena memilih memisahkan diri dari Indonesia. Dalam kedua kasus itu TNI dan milisi memilih desa-desa tempat tinggal beberapa pemimpin prokemerdekaan dan melancarkan pembersihan massal para pemuda.

861. Yang dibunuh dalam pembantaian di Passabe pada 10 September adalah orang-orang yang mengungsi dari tiga desa di Subdistrik Oesilo.¹⁰⁴⁴ Pada 9 September anggota milisi Sakunar diperintahkan oleh M115 untuk pergi ke Imbate, Timor Barat (Miomafu Timur, TTU). Dalam perjalanan ke Imbate, di suatu tempat bernama Puput, Timor Barat, anggota milisi dilaporkan membacok sampai mati seorang warga sipil bernama Neti Lafu dari Desa Usitakeno (Oesilo, Oecussi).¹⁰⁴⁵ Sementara itu penduduk dari tiga desa yang telah mengungsi ke hutan di Imbate diperintahkan kembali turun ke kantor desa Imbate untuk mendaftarkan nama mereka. Ketika mereka datang, sekitar 55 pemuda yang dicurigai pendukung kemerdekaan dipisahkan dari yang lain. Para pemuda ini di antaranya adalah Francisco Sufa, Lambertu Punef, Paulinus Neno, José Ulan, Zacarias Mauno, Adriano Neno, Zacarias Tolo, Kolo Lopo, None Sufa, Kobus Henas, Dominikus Obe, Yohanes Suni, Baptista Elo, Poto Ulan,¹⁰⁴⁶ Poto Mauno, Martinho Bobo, Ili Afoan, dan Poto Sufa.* Seorang saksi mengatakan kepada Komisi bahwa Ernesto Bobi mencoba melarikan diri tetapi dalam perjalanan dia dibacok hingga mati.¹⁰⁴⁷ Mereka dipaksa untuk meninggalkan Imbate dengan berjalan kaki. Sekitar pukul 03.00 pada 10 September mereka sampai di perbatasan antara Timor Leste dan Timor Barat di Teon Lasi. Setelah satu kelompok menyeberangi Sungai Noel Passabe, di sebuah tempat bernama Nifu Panef, milisi mulai membunuh para pemuda. Seluruhnya lebih daripada 47 orang dibunuh, walaupun tujuh atau delapan berhasil melarikan diri. Gabriel Kolo, André Ulan, Anton Sabraka, Florenço Tacaqui, Tomas Bubun Antonio Sila, Mateus Ceus, Agustinho Ero, dan Bonifacio Bobo, semuanya adalah anggota milisi Sakunar, diduga ikut dalam pembunuhan ini. Milisi yang sama lalu pergi ke Passabe dan memerintahkan penduduk untuk pergi ke lokasi pembunuhan dan mengubur mayat-mayat itu. Penduduk desa juga diancam kalau mereka tidak tutup mulut, mereka akan dibunuh.¹⁰⁴⁸

* Pernyataan HRVD 6909. Martinho Bobo kelihatannya berhasil melarikan diri (lihat Pernyataan HRVD 2828).

862. Komisi telah menerima beberapa pernyataan dari para korban yang selamat, saksi, dan anggota keluarga dari korban pembunuhan.¹⁰⁴⁹ Anggota milisi Sakunar, yang mengawal tahanan, memberikan kesaksian berikut kepada Komisi:

Pada bulan September 1999, saya dipanggil oleh M182 dengan anaknya yang bernama M183 supaya bergabung dengan Milisi Sakunar di Meocora, Desa Usitasae [Oesilo, Oecussi]...Setelah aku bergabung dengan mereka, saya diberikan sebuah korek api oleh M165 untuk membakar rumah penduduk di Subdistrik Passabe...Pada tanggal sembilan, saya melihat M299, M187, M190, M191, M194, dan M115 dari Passabe dan tiga orang TNI dari Passabe juga yakni M165, M196, dan M198, membawa senjata, serta milisi sebanyak yang tidak dapat dihitung...Mereka menuju Imbate, Timor Barat, untuk menangkap orang CNRT yang sembunyi di sana. Pada waktu itu mereka juga berhasil menangkap orang-orang CNRT tersebut kemudian dibawa ke Kantor Desa Imbate. Pada waktu itu aku juga ikut dengan para milisi tersebut ke Imbate. Setelah mereka membawa para korban CNRT tiba di kantor desa Imbate, para korban diikat tangan secara bergandengan. Jumlah mereka yang diikat pada waktu itu berjumlah sekitar 70 orang, dan mereka tersebut berasal dari desa Bobometo [Oesilo, Oecussi]. Kemudian kami membawa mereka ke lokasi Teon Lasi, Desa Abani, pada malam harinya. Kemudian pada pukul 3 pagi para korban ditembak mati oleh TNI, dan sebagiannya dibacok mati oleh M115, pemimpin milisi Sakunar. Termasuk saya juga membacok satu orang secara langsung di lehernya tetapi orang tersebut tidak meninggal. Jadi sekitar 69 orang yang dibunuh oleh milisi Sakunar di lokasi Teon Lasi, Desa Abani, Subdistrik Passabe.¹⁰⁵⁰

863. Seorang yang selamat dari pembunuhan juga memberikan pernyataan kepada Komisi:

Kami yang diikat pada waktu itu berjumlah kurang-lebih 70 orang. Setelah diikat, lalu kami diperintahkan keluar dari Kantor Desa ke lokasi Nefopana [Passabe, Oecussi]. Tetapi dari belakang para anggota milisi Sakunar memukul kami dengan kayu balok hingga babak belur. Tepat jam 03.00 pagi kami juga sampai di lokasi Nefopana Passabe, di sana M201 dan M204 mulai dengan membacok leher Marcos Kono. Dia langsung mati di tempat. Kemudian M206 mengatakan kepada temannya bahwa singkirkan mayat tersebut. Mendengar ucapan demikian maka saya bersama Lafu Seco langsung menjatuhkan diri ke tanah. Kemudian kedua korban jatuh di atas kami, sehingga darah mereka membasahi kami, maka disangka bahwa kami juga meninggal dunia.¹⁰⁵¹

864. Sekitar pukul 06.00 keesokan harinya, sekitar 100 orang dari Desa Passabe diperintahkan oleh anggota milisi untuk mengumpulkan peralatan yang bisa digunakan untuk memperbaiki jalan. Mereka kemudian dibawa ke lokasi pembantaian dan diperintahkan menguburkan mayat-mayat di mana mereka jatuh.

865. Eksekusi massal kedua terjadi di sekitar Maquelab (Pante Makassar, Oecussi) pada 20 Oktober. Di sore hari itu anggota milisi bersenjata, dengan mengendarai delapan truk, datang ke daerah itu mencari orang-orang yang telah lari dari Maquelab berlindung ke gunung-gunung. Mereka menemukan sekitar 300 orang dari desa dan memberitahu bahwa warga harus ikut dengan mereka kembali ke Maquelab dan dapat melakukan perjalanan dengan aman ke Timor Barat. Milisi kemudian menggiring mereka sepanjang lima kilometer kembali ke desa. Setibanya mereka di Maquelab, komandan milisi, Bonifacio Bobo, menarik dua pemimpin CNRT, Atili da Costa dan Paulus Cussi, membawa mereka ke belakang Pasar Maquelab dan menembak mati keduanya.*

866. Sekitar 30 menit kemudian, wakil komandan Sakunar, M120, sampai di tempat, memilih empat orang laki-laki, menyuruh mereka berdiri, kemudian menembak mereka. Para korban adalah: Ketua Keamanan CNRT dan anggota staf lokal UNAMET, Francisco Taek; anggota staf lokal UNAMET lain, Paulos Kelo; seorang pelajar prokemerdekaan, Mateus Ton;† dan pemimpin CNRT, João Talias.¹⁰⁵² Tak lama setelah pembunuhan ini, dan atas perintah, milisi Sakunar membakar semua rumah dan bangunan di Maquelab, tanpa kecuali. Sore itu mereka juga membunuh enam atau mungkin tujuh orang di desa tersebut sebelum berangkat ke Timor Barat.¹⁰⁵³

867. Seorang saksi mata bercerita kepada Komisi:

Pada tanggal 20 Oktober 1999, kurang lebih 20 orang gabungan antara pasukan TNI, Polri, milisi Sakunar, dan Aitarak, melakukan penyerangan besar-besaran terhadap masyarakat di Taiboco [Pante Makassar, Oecussi]. Pada waktu itu aku bersama keluarga mengungsi ke Neten Abas. Namun Komandan Milisi Sakunar M213, berhasil ketemu kami. Setelah ditangkap kemudian kami dipaksa memberikan uang kepada mereka. Pada waktu itu kami mengumpulkan uang sebanyak Rp300.000, kemudian memberikan kepada mereka, agar kami jangan dibunuh. Setelah memberikan uang, kami semua dikawal secara ketat oleh Milisi Sakunar. Kemudian dipaksa berjalan sejauh 5 km dari tempat persembunyian kami di Neten Abas ke Pasar Maquelab. Setelah kami tiba di Pasar Maquelab, ada seorang anggota

* Pernyataan HRVD 0377; 0865; Pendakwaan Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat terhadap Laurentino Soares, alias Moko, dan Bonifacio Bobo, alias Bone, Perkara No. 13/2002, (OE-4-99-SC), paragraf 14-29. Nama-nama korban tertulis secara berbeda di pernyataan dan pendakwaan masing-masing: di Pernyataan HRVD 0377, ditulis Atili da Costa dan Paulus Cussi; di Pernyataan HRVD 0865 sebagai Atilio Costa dan Paulo Cusi, padahal di Pendakwaan Wakil Jaksa Penuntut Umum tertulis sebagai Justifilio da Costa dan Paulus Kusi (paragraf 22).

† Di Pendakwaan Wakil Jaksa Penuntut korban ini disebut sebagai Mateus Tone (Perkara No. 13/2002, paragraf 18).

Milisi Sakunar bernama M212 yang mencoba bunuh saya dengan cara mengayunkan parang bersama sarungnya, dan kena pada bagian mulut dan gigi. Akibatnya tiga buah gigi taring bagian atas langsung jatuh, kemudian darah mengalir dan sayapun langsung pusing. Saat itu saya hanya diam, tidak berteriak, tidak menangis. Setelah itu kami duduk dan sekitar 30 menit kemudian komandan Sakunar bernama M213 datang dan menarik Atili da Costa dan Paulus Cussi. Keduanya ditarik dan dibawa ke belakang pasar tersebut, tepat di WC, keduanya dibunuh oleh pelaku dengan cara menembak, kemudian mayat kedua korban dibuang atau dimasukkan dalam lubang sampah.

Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian (pukul 15.00 WIT saat itu), seorang wakil komandan milisi Sakunar Oecussi bernama M120, tiba di lokasi tersebut dengan sebuah motor. Saat itu tidak ada komentar apa-apa. Dia langsung panggil keempat orang yaitu João Talias, Paulus Kelu, Mateus Ton, dan Fransisco Taek. Setelah keempat orang dipanggil kemudian M120 hanya mengatakan sambil tunjuk “Kau bangun” langsung orang pertama Joao Talias bangun dan begitu baru dua langkah ke depan, langsung ditembak dan peluru menembus dada. Setelah selesai ganti dengan dua orang berikutnya dengan perlakuan yang sama. Selanjutnya sampai orang terakhir (Fransisco Taek) itupun sama karena baru satu langkah ke depan korban langsung ditembak hingga jatuh ke tanah...Saat itu semua keluarga dan masyarakat yang berada di lokasi kejadian diperintahkan agar tunduk kepala, dan mereka diperingatkan agar tidak berteriak ataupun menangis. Keempat korban yang telah tewas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mobil Kijang milik Moko Soares. Kemudian dibawa pergi, entah ke mana. Pada saat itu saya tidak melihatnya. Kemudian kami semua disuruh naik truk untuk mengungsi ke Kefa [Kefamenanu, Timor Barat].¹⁰⁵⁴

Pembunuhan massal lain

868. Komisi juga telah menerima kesaksian tentang pembunuhan massal lain yang terjadi pada masa kekerasan pasca Jajak Pendapat. Pada 12 September, terjadi pembunuhan massal terhadap penduduk di Distrik Covalima, di sebuah desa bernama Lactos (Fohoren, Covalima). Warga Lactos menolak dibawa ke Timor Barat. Setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat, penduduk desa Lactos bersembunyi di bukit-bukit. Kelompok milisi Laksaur di Lactos, dipimpin komandannya, M111 dan wakilnya, M220, menerima perintah dari komandan besar Laksaur, M78 di Salele (Tilomar, Covalima) bahwa seluruh penduduk sipil harus pergi ke Timor Barat.

869. Pada atau sekitar 12 September, setelah berbicara empat mata dengan Letnan M222, komandan unit TNI di Lactos, Cosmos Amaral, memerintahkan anakbuahnya memperbaiki pipa air yang rusak. Setelah memperbaiki pipa, satu kelompok yang terdiri atas Letnan M222 dan sekitar 20 anggota TNI, M220, dan sejumlah anggota

milisi dan Milsas Timor Timur dipimpin oleh M224 pergi ke Rai Ulun. Mereka menemukan penduduk desa dan menyuruh mereka pergi ke Timor Barat.⁷

870. Penduduk desa tersebut, bersenjatakan parang, mengatakan bahwa mereka tidak mau pergi. Ketika para penduduk maju, tiba-tiba anggota TNI, Milsas Timor Timur, dan anggota milisi mulai menembak dan membunuh 14 warga desa. Satu orang lagi ditikam sampai tewas. Para korban pembunuhan adalah: Antonio Amaral Bau, Alberto Ferreira, Ernesto Carvalho Letto, Anito Coli, Anito Mali, Anito Bau, Daniel Monis Aci, Domingos Amaral, Eurico Bau, Daniel Taek, Abel Soares Gomes, José do Rego, Geraldo Amaral dan Boaventura de Araújo. Laki-laki yang ditusuk hingga tewas adalah Boaventura.¹⁰⁵⁵

871. Pembunuhan massal lain terjadi di Becora (Dili), wilayah kekuatan prokemerdekaan, pada 4 September. Anggota kelompok milisi Aitarak dan Besi Merah Putih, bersama anggota TNI dan polisi, dilaporkan membunuh delapan orang. Para korban termasuk André de Araújo, Cristovão da Silva, Domingos Martins da Silva, Joaquim da Costa, Filipe dos Santos, dan Carlos Martins Oliveira. Dua korban lainnya hanya dikenal dengan nama Marcelo dan Aceng atau Asam.¹⁰⁵⁶

Kesaksian seorang anak yang selamat

Di Desa Lourba (Bobonaro, Bobonaro), milisi Dadurus Merah Putih menyerang secara amat kejam pada masa setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat. Satu keluarga mengalami penyerangan yang brutal sekali di dalam rumah mereka, yang mengakibatkan kematian ibu, ayah, dan anak perempuan yang berusia 17 tahun, karena mereka ditembak dan dibacok. Anak perempuannya yang lain, berusia sembilan tahun, yang kata-katanya disalin berikut ini, dibacok dengan parang di hidungnya. Bekasnya masih terlihat jelas sampai sekarang. Saudara sepupunya yang berusia 7 tahun ketika itu, juga terkena bacokan di mulutnya, sampai giginya patah. Anak yang selamat dari penyerangan itu memberitahu Komisi:

Nama saya A, saya adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Sebenarnya saya tidak tahu apa-apa yang namanya politik dan biasanya Bapak dan Mama saya yang sering melakukan kegiatan Klandestin suka membantu Falintil tapi saya sendiri tidak tahu kalau itu adalah pekerjaan politik. Pada waktu situasi lagi ramai membicarakan Otonomi atau Ukun Rasik-An saya hanya tahu Ukun Rasik-An artinya Kita Merdeka. Dan kebetulan semua keluarga saya adalah orang ukun

.....
* Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan tempat kejadian pembantaian ini. Menurut Pernyataan HRVD 6270, terjadi di Desa Lactos, padahal menurut Pendakwaan Wakil Jaksa Penuntut Umum (Perkara No. 09/2003), pembantaian tersebut terjadi di Rai Ulun, di Desa Lactos. Namun, Rai Ulun adalah kampung di Desa Leohitu (Balibó, Bobonaro).

rasik-an jadi saya tahu sedikit. Saat menjelang Jajak Pendapat situasi di Bobonaro sudah sangat memburuk dan kedua orangtua saya sudah gelisah tapi saya dan saudara-saudara saya yang lain merasa biasa-biasa saja karena kami tidak tahu politik. Pada tanggal 30 Agustus 1999 bertepatan dengan Jajak Pendapat di seluruh Timor Loro Sa'e kami anak-anak disuruh tinggal di rumah karena akan ditembak oleh milisi dan TNI jadi ya kami tinggal. Pada waktu diumumkan hasil Jajak Pendapat bapak dan mama saya senang sekali karena kita menang tapi situasinya tidak seburuk yang dulu. Jadi, kami sekeluarga tenang-tenang saja di rumah.

Pada tanggal 6 September 1999 sore hari, para milisi Dadurus Merah Putih (DMP) dan TNI mulai masuk ke Desa Lourba melepaskan tembakan secara brutal ke udara sambil mencaci maki warga setempat. Pada tanggal 7 September pagi sekali saya tidak tahu jam berapa kampung kami Lourba dikepung oleh milisi DMP dan TNI tapi saya dan kedua orangtua tidak tahu apa-apa. Begitu mama saya melihat para milisi dan TNI sudah mengepung di rumah kami dan mama langsung memberitahu sambil berteriak ke mama kecil saya yang letak rumahnya tidak begitu jauh dari rumah kami, untuk segera lari keluar karena kedua rumah sudah dikepung. Begitu tante saya lari keluar langsung ditembak oleh TNI kena di pinggul kiri tapi masih sempat melarikan diri.

Bapak dan mama dengan kami berempat berada dalam rumah tidak bisa keluar lagi karena milisi dan TNI sudah siap siaga. Tetapi tetangga yang lain sudah lari berantakan, ada yang lari bersembunyi di kebun ada yang menyembunyikan diri di semak-semak yang lebat sehingga tidak kelihatan. Waktu orang lari berantakan, mama saya masih berkata bahwa kita tidak boleh keluar dari rumah lebih baik bertahan saja, untuk apa harus lari. Namun akhirnya kami sekeluarga berusaha keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, para milisi dan TNI mengejar bapak saya karena bapak berusaha lari, akhirnya langsung ditembak. Setelah TNI dan milisi menembak, mereka kemudian mendekati tubuh bapak saya dan membacoknya sampai mati di tempat.

Waktu itu saya mengikuti mama sehingga tangan saya dipegang oleh mama. Saya dan mama juga dikejar oleh milisi dan TNI, mama kena tikam persis di uluhati dan tembus ke belakang. Sesudah ditikam mereka langsung memotong kedua pahanya sehingga tangan saya terlepas dari genggamannya. Pada waktu mama melepaskan tangan saya dan saya menangis sambil memeluk mama karena dia mengalami luka yang sangat parah, tapi penjahat langsung membacok di hidung saya. Sebelum mama meninggal, mama hanya meninggalkan pesan bahwa "Oan hela ba maske ita mate hotu, ida deit mos ita sei ukun rasik an," [Tinggal saja, anak, biar kita mati semua, tetap ada satu yang

akan dapat kemerdekaan] mama langsung menghembuskan napas yang terakhir sambil mengepalkan tangannya begitu pun bapak. Dan waktu itu, banyak darah yang mengalir dari luka bacokan sehingga saya juga pingsan di samping mama dan mereka kira saya sudah meninggal sehingga para penjahat pergi.

Tiba-tiba jiwa mama langsung mengangkat tubuh saya dan diletakkan dekat rumah dan saya langsung sadar kembali, setelah saya sadar saya melihat ke rumah tante, saudara sepupu saya sedang dibuang oleh milisi dan TNI setinggi kurang lebih 3 meter tapi tubuhnya sudah penuh dengan darah yang dari perutnya. Dan saudara saya Lucia sudah menjadi mayat sedangkan tante saya sedang bersembunyi di got. Karena keluarga saya ada yang sudah meninggal dan ada yang mengalami luka parah sehingga para milisi DMP dan TNI langsung pergi meninggalkan rumah.

Satu jam kemudian baru para tetangga kami kembali untuk mengumpulkan kami yang sedang luka parah dan ketiga mayat dari bapak, mama, dan sepupu saya Lucia sedang dikumpulkan oleh para tetangga. Malam harinya kami masih sempat melayat semalam suntuk, menjelang pagi tiba-tiba ada serangan lagi oleh milisi dan TNI sehingga kami semua lari keluar dari rumah. Ketiga mayat itu dimasukkan dalam kamar baru dikunci.

Dan kami melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Lour. Di sana para Falintil yang mengobati luka kami dengan menggunakan obat tradisional. Dan atas berkat Tuhan semua luka yang parah dapat sembuh total. Setelah Interfet menguasai kota Dili baru kami kembali dari Lour menuju ke rumah. Setiba di rumah, kamar-kamar yang berisi mayat sudah dibongkar oleh milisi dan TNI sehingga ketiga mayat itu sudah dimakan ditarik oleh anjing dan hewan lainnya. Bangkai mayat tersebut dibawa oleh anjing, selama empat bulan kami sering mencari sisa-sisa tulang mereka yang dapat kami kumpulkan.

Saya merasa sebagai anak perempuan harus bekerja bersama abang-abang saya untuk mencari tulang-tulang mama dan papa di mana, sampai sekarang belum lengkap. Saya tidak tahu bagaimana masa depan kami, karena kami masih kecil siapa yang akan menanggung hidup kami nanti? Saya percaya walau orangtua saya sudah meninggal namun rohnyanya masih bersama kami. Suatu hari masih ada hukuman bagi mereka yang membunuh kedua orangtua saya. Ini yang saya inginkan, harus ada hukum dan keadilan.¹⁰⁵⁷

Pembunuhan terhadap pengungsi di kamp-kamp dan di tempat lain di Timor Barat

872. Ribuan orang dipaksa naik ke atas truk-truk dan kapal-kapal oleh pasukan keamanan Indonesia dan kelompok-kelompok milisi untuk dievakuasi ke Timor Barat (lihat juga Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan). Beberapa dari mereka pergi secara sukarela, mencari rasa aman. Sebagian besar dari mereka diangkut ke kamp-kamp. Kondisi keamanan di kamp-kamp pengungsi di Timor Barat mengerikan. Hampir semua kamp pengungsi dikelola oleh otoritas Indonesia dan para pemimpin militer atau milisi yang mengontrol kamp-kamp tersebut sebagai “koordinator kamp”.¹⁰⁵⁸ Lebih dari 200 kamp pengungsi dibangun di empat distrik/kabupaten yaitu di Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara (TTU), dan Timor Tengah Selatan (TTS), dan Kupang. Menurut Satuan Koordinasi dan Pelaksana Penanggulangan Bencana Pengungsi Nusa Tenggara Timur (Satkorlak PBP NTT), pada 4 September terdapat 336.043 pengungsi (56.334 kepala keluarga) di Timor Barat. Pada pertengahan Oktober jumlah ini menurun menjadi 264.454 pengungsi.¹⁰⁵⁹ UNHCR memberikan jumlah 250.000-280.000 orang.¹⁰⁶⁰ Selain mereka yang diangkut ke kamp-kamp pengungsi, ada juga orang-orang Timor-Leste yang lari atau dibawa secara paksa ke Timor Barat secara perorangan atau dalam kelompok-kelompok yang kecil. Semua pengungsi ini berada dalam bahaya, terutama jika mereka teridentifikasi sebagai pihak prokemerdekaan.

873. Informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh para anggota TNI dan milisi di kamp-kamp pengungsi dan di berbagai tempat di Timor Barat pada September dan Oktober 1999 tidak lengkap. Hampir semua pelanggaran hak asasi manusia ini belum diselidiki secara memadai oleh otoritas yang bertanggung jawab. Karena itu, di antara mereka yang diyakini telah dibunuh atau dihilangkan di Timor Barat antara lain adalah pemimpin senior CNRT, Mau Hodu Ran Kadalak (José da Costa), namun Komisi tidak dapat menentukan keadaan bagaimana penghilangan atau kematian itu, atau jika telah meninggal, di manakah tepatnya jenazah dikuburkan. Gambaran umum tentang pelanggaran di Timor Barat dengan demikian sangat terbatas namun banyak cerita kuat menunjukkan bahwa banyak pelanggaran berat hak asasi manusia dilakukan terhadap para pendukung atau mereka yang diduga sebagai pendukung kemerdekaan di Timor Barat. Komisi menerima informasi tentang 27 pembunuhan dan penghilangan yang terjadi di dua kabupaten yaitu Belu dan Timor Tengah Utara.

Belu

874. Kabupaten Belu, dan ibukotanya, Atambua, merupakan lokasi sebagian besar pengungsi pada periode tersebut. Di Belu setidaknya 20 orang dibunuh atau dihilangkan. Agostinho Martins Trindade telah dipaksa bergabung dengan Aitarak. Selagi di Atambua dia dilaporkan telah dibunuh.¹⁰⁶¹ Armando da Silva dilaporkan ditangkap oleh tiga orang polisi. Istrinya kemudian pergi ke Polres dan menanyakan keberadaan suaminya. Namun kemudian dia diancam dan mereka bertanya apakah dirinya ingin mati seperti suaminya. Armando da Silva kemudian hilang.¹⁰⁶²

Venancio do Rêgo, kepala desa Fatumean, Distrik Covalima, dan seorang anggota klandestin, telah ditangkap oleh anggota milisi Laksaur di Nenuk, dan diapun hilang.¹⁰⁶³ Vong Neong Song dan keluarganya mencari perlindungan di Polda Dili dan pada 9 September mereka menumpang sebuah kapal laut militer Indonesia. Vong Neong Song hilang dalam perjalanan ke Atambua.¹⁰⁶⁴

875. Celestino Correia disebutkan telah dibunuh di dalam sebuah kamp pengungsi di Kolam Susu (Atapupu, Belu), Timor Barat, pada 14 September. Seorang anak dari M295, komandan milisi Halilintar dan Armui, berusaha memaksa Celestino Correia bergabung dengan milisi, namun dia menolak. Anak lelaki M295 menderita luka ringan dalam insiden tersebut dan dibawa ke klinik. Sebagai tindakan balasan Anastacio Martins dan dua orang lain mencari Celestino Correia dan memukuli dia sampai mati di hadapan pengungsi lain.¹⁰⁶⁵

876. Georgina Tilman berada di antara para pengungsi dari Ermera yang tinggal di Siskoe, Atambua. Domingos Maia, yang dulu bertugas sebagai supir pemerintah di Ermera, dipaksa jadi supir untuk milisi Darah Merah. Pada 18 September dia meminta bertemu dengan para pengungsi dari Ermera yang berada di Siskoe. Di situ, Domingos melihat Georgina Tilman; Georgina sedang cuci muka dan dikawal oleh seorang bersenjata*. Dua hari kemudian Domingos Maia diberitahu bahwa Georgina telah dibawa dan dibebaskan di persimpangan di Mandoki (Atabae, Bobonaro). Dia pergi ke sana dan menemukan mayat Georgina dan kelima anaknya. Mayat-mayat tersebut kemudian dikuburkan di tempat yang sama.¹⁰⁶⁶

877. Pada 19 September Manuel Soares dan Mário de Araújo sedang bermain bola voli di lapangan olahraga Atambua (Timor Barat), ketika mereka dilaporkan telah dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil dan dibawa ke Buas oleh sekelompok anggota milisi AHI dari Aileu di bawah komando M160. Mereka diikat dan dibawa ke hutan bambu di mana mereka dilaporkan telah dibunuh.¹⁰⁶⁷

878. Seorang mantan anggota Falintil, Pascoal da Costa Calau, dilaporkan diculik dari sekolah dasar Tanah Merah oleh sebuah kelompok yang terdiri atas sekitar 20 orang anggota milisi Aitarak pada 30 September. Dia tak pernah dilihat lagi sesudah itu.¹⁰⁶⁸

879. Apolinario Maujoni berada di antara pengungsi dari Bobonaro yang tinggal di Lakmaras (Atambua, Timor Barat). Pada 12 Oktober dia dengan seorang lain ditangkap dan dilaporkan telah dibunuh. Keberadaannya tak pernah diketahui lagi.¹⁰⁶⁹

880. Pada 15 Oktober, Edmundus Bere, yang pernah bekerja untuk Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur (DSMPTT), ditangkap dan dibawa ke pos milisi Laksaur di Lakmaras (Atambua, Timor Barat). Di sana dia dipukul, dan lukanya digosok dengan garam. Pada 17 Oktober, dia dilaporkan telah dibunuh di tempat bernama Bora (Timor Barat).¹⁰⁷⁰

881. Orang-orang yang berusaha untuk menghubungi keluarga mereka di Mota'ain (Belu, Timor Barat) di perbatasan juga menjadi sasaran. Augusto Soares bertemu

* Georgina Tilman adalah adik *alin sarani* atau adik baptis Domingos Maia, berarti orangtua Domingos adalah orangtua baptis Georgina dan hadir sebagai saksi saat pembaptisan Georgina.

dengan saudara perempuannya pada 20 Oktober di Mota'ain. Setelah pertemuan itu Augusto Soares dilaporkan dibunuh oleh milisi Darah Merah Putih dari Ermera.¹⁰⁷¹ Anggota klandestin Celestino Soares, yang sedang tinggal bersama keluarganya di Tenu Bo'ot (Timor Barat), dibawa oleh anggota-anggota kelompok milisi Aitarak. Pada 30 Oktober mayatnya ditemukan di Saloreh (Timor Barat).¹⁰⁷²

Timor Tengah Utara (TTU)

882. Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan Oecussi. Sebagian besar pembunuhan di TTU yang dilaporkan ke Komisi melibatkan milisi Sakunar yang mengejar pengungsi dari Oecussi yang diketahui berafiliasi dengan CNRT. Komisi menerima kesaksian mengenai setidaknya tujuh pengungsi yang dibunuh atau dihilangkan.

883. Firmino No'o adalah seorang pelajar yang prokemerdekaan. Suatu hari di September, ketika dia kembali ke Oecussi dari Hali dia dicegat di sebuah pos milisi di Oel Faub, Kefamenanu, karena dia menggunakan kaos bertulisan CNRT. Dia diikat dan dipukuli oleh milisi Sakunar termasuk komandannya, M120. Dia dilaporkan dibawa ke dibawa ke Oel Faub, Iri, dan di sana dia dibunuh. Diperkirakan bahwa tubuhnya dikubur di Timor Barat dan belum ditemukan sampai sekarang.¹⁰⁷³

884. Pada akhir September seorang anggota CNRT, Horacio Auni, dilaporkan telah dibawa oleh komandan milisi Sakunar, M120, dari kamp pengungsian Bu'uk dan sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya.¹⁰⁷⁴

885. Constancio Seni, dari Subdistrik Oesilo, distrik Oecussi, mengungsi ke Oeneno, Kefamenanu (Timor Barat), ketika desanya diserang oleh Sakunar pada 8 September. Dia dilaporkan telah dibawa oleh sekelompok besar yang terdiri atas 70 anggota milisi. Keberadaannya tidak diketahui lagi.¹⁰⁷⁵

886. Batista Bobo, seorang penghuni daerah Tumin, Desa Bobometo, mengungsi ke Bu'uk, Kefamenanu untuk menghindari dari serangan Sakunar terhadap desanya pada 8 September, namun dilaporkan dibunuh di Bu'uk pada 9 September.¹⁰⁷⁶

Pembunuhan dan penghilangan lain pasca-pemungutan suara yang dilaporkan kepada Komisi

887. Dalam tabel berikut, Komisi merangkum kejadian-kejadian lain pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa sejak 1999 yang dilaporkan 1999.

Tabel 55: Rangkuman kasus pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa sejak 1999 yang dilaporkan kepada Komisi

| Kecamatan, Kabupaten | Ringkasan |
|-----------------------------|---|
| Aileu, Aileu | <p>Pada 4 September sekelompok anggota milisi AHI dilaporkan membunuh Antonio Ribeiro di Malere, Desa Seloi.¹⁰⁷⁷ Pada hari yang sama sebuah kelompok lain dari para anggota AHI yang dipimpin oleh <i>Liurai</i> M163 dilaporkan membunuh seorang pria yang dikenal sebagai Marçal dari Viqueque di Mantane, Desa Lausi.¹⁰⁷⁸</p> <p>Pada 5 September sekelompok anggota AHI menembak mati dua orang bersaudara, Guilherme dan Gabriel de Deus Lobato. Keduanya tewas setelah tiba di Rihui, Desa Madabeno (Laulara).</p> <p>Pada 6 September Babinsa Aissirimou, Sersan Domingos Alberto Carlos, menembak mati anggota CNRT Elias de Araújo. Sersan Domingos Alberto Carlos juga dituduh memerintahkan dua pemimpin AHI, Carlos José dan Almeida Martins, untuk membunuh Evaristo Lere Barreto. Kedua orang itu membacok Evaristo Barreto sampai mati.¹⁰⁷⁹</p> <p>Seseorang yang diketahui dengan nama Maulere ditemukan tewas di Sungai Manutane. Dipercaya bahwa dia dibunuh oleh salah satu kelompok prointegrasi.¹⁰⁸⁰</p> <p>Pada 9 September seorang anggota TNI, Gaspar Leite, diduga menembak mati Domingos Maukinta dalam serangan terhadap Desa Hohulu.^{4 1081}</p> <p>Pada 11 September seorang anggota AHI dilaporkan membunuh Tome Araújo di Malere, Desa Seloi.¹⁰⁸²</p> <p>Pada 13 September Marcelino Timosila dilaporkan telah dibunuh di markas Kodim Alieu oleh seorang anggota TNI.¹⁰⁸³</p> <p>Pada 16 September seorang anggota kelompok milisi Darah Integrasi dilaporkan membunuh seseorang yang bernama Domingos.¹⁰⁸⁴</p> <p>Pada 17 September João da Conceição Tilman dilaporkan telah ditembak mati oleh anggota-anggota TNI di Sungai Kotalirei, ketika dia berjalan ke Maurusa.¹⁰⁸⁵</p> |
| Laulara dan Lequidoe, Aileu | <p>Pada 6 September seorang anggota TNI, Adolfo Amaral, menembak Francisco Aleixo (alias Carvalho) di persimpangan jalan Dili-Aileu dekat Desa Koto Lau (Laulara). Dia mati di tempat dan tubuhnya ditemukan sebulan kemudian.¹⁰⁸⁶</p> <p>Pada 17 September sebuah kelompok gabungan antara anggota-anggota AHI dan TNI menembak mati Marçal Alves di Urbada, Desa Fucuculau (Laulara).¹⁰⁸⁷</p> <p>Di Subdistrik Lequidoe, setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat, sekelompok Rajawali yang diduga dipimpin oleh M175 [orang Timor], membunuh Miguel F Soares.¹⁰⁸⁸</p> |
| Ainaro, Ainaro | <p>Pada 5 September sekelompok anggota Mahidi, termasuk Fernando Lopes dan Anigio de Oliveira, menyerang Fernando Gomes di rumahnya di Cassa. Diduga bahwa Fernando Lopes menembak mati dia.¹⁰⁸⁹</p> <p>Pada 13 September, para anggota Mahidi dilaporkan telah melakukan pembunuhan terhadap Paulino Maria Bianco. Paulino Bianco telah ditahan pada hari sebelumnya dan pada 13 September dia diserahkan kepada pemimpin Mahidi, M81. Kepalanya ditutupi dengan kantong plastik, dan atas perintah M81 dia dibawa ke tempat yang dikenal sebagai Sildena Hare Kain dan dibunuh.¹⁰⁹⁰</p> |
| Hato Builico, Ainaro | <p>Pada 4 September Diogo de Araújo dan Felix de Araújo, keduanya dicurigai sebagai anggota Fretilin, dilaporkan telah dibunuh di pos TNI dan Mahidi di Calihata, Desa Mulo.¹⁰⁹¹</p> |

* Menurut Pernyataan HRVD 4861, nama korban ini adalah Domingos de Jesus Mesquita.

| | |
|------------------|---|
| Hato Udo, Ainaro | <p>Pada 4 September seseorang yang diketahui bernama Moises ditangkap oleh para anggota Mahidi, dan ditahan di pos Mahidi di Desa Beikala selama sekitar seminggu. Kemudian dia diserahkan kepada anggota Ablai, dan dibawa ke Same. Tidak pernah dilihat lagi.¹⁰⁹²</p> <p>Pada 6 atau 7 September seseorang yang dikenal sebagai Domingos Guru ditembak dan dibacok sampai mati oleh kelompok gabungan TNI dan Mahidi di desa Beikala. Menurut laporan, Syamsudin, seorang anggota TNI, terlibat dalam pembunuhan Domingos Guru tersebut.¹⁰⁹³</p> <p>Pada 30 September sebuah kelompok yang terdiri atas sepuluh orang anggota Ablai yang dipimpin oleh M186 dilaporkan membunuh Maria Imaculada dekat sebuah gua di Lesso, Desa Beikala.¹⁰⁹⁴</p> |
| Maubisse, Ainaro | Joana Soares dan anak laki-laknya, Eusebio Nurega, dilaporkan telah dibunuh ketika terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah di Aihou, Desa Aituto. Tanggal pasti insiden ini tidak diketahui. ⁵ |
| Quelecai, Baucau | <p>Pada 10 September TNI dan Tim Saka diduga membunuh Sebastião dos Reis di Desa Guruça.</p> <p>Pada 11 September sekelompok anggota Tim Saka yang dipimpin oleh Komandan Manuel Ariate, wakil-wakilnya, Cosme Moreira dan Virgilio Soares, dan komandan Rajawali Cristiano Ximenes menghampiri Pedro da Cruz Soares, seorang pendukung kemerdekaan yang tinggal di Dusun Abo Lir. Cosme Moreira menembak dia sampai mati.¹⁰⁹⁵</p> <p>Tim Saka yang dipimpin oleh Manuel Ariate juga dilaporkan telah menembak mati seorang pemuda asal Guruça yang dikenal sebagai Celestino pada 9 September.¹⁰⁹⁶</p> |
| Laga, Baucau | <p>Sekelompok anggota TNI membunuh setidaknya dua orang dalam dua kejadian yang berbeda. Sersan Satu Faustino dos Santos, Kopral Satu Agostinho Soares dan Sersan Dua Tomás Cardoso (alias Tomás Maurade), semuanya dari seksi intelijen Kodim, diduga membunuh Armindo Belo Pires di Pantai Laga pada 11 September. Armindo Belo Pires, penduduk Desa Soba, sedang berjalan ke pantai untuk mengunjungi beberapa kerabat yang telah berkumpul untuk menunggu kapal laut yang akan berangkat ke Timor Barat. Para tentara tersebut menuduh Pires sebagai anggota Fretilin dan dilaporkan membunuhnya di hadapan orang banyak yang sedang menanti kedatangan kapal laut.¹⁰⁹⁷</p> <p>Keesokan harinya Faustino dos Santos dan Agostinho Soares memimpin sebuah Tim Patroli ke Desa Tekinomata. Ketika mereka tiba di dekat desa tersebut, Agostinho Soares memerintahkan anakbuahnya membunuh setiap laki-laki dan perempuan yang mereka temui. Faustino dos Santos menghampiri rumah tempat Marcela Buti Fatima sedang menggendong bayi dan berdiri di belakang pintu belakang yang setengah terbuka. Faustino dilaporkan menembakkan senjatanya ke pintu belakang tersebut dan menembak Fatima di bagian kaki. Fatima tewas akibat luka-lukanya malam itu.¹⁰⁹⁸</p> <p>Pada 21 September enam warga desa dibunuh di Laga oleh anggota Batalion 745 di bawah komando Mayor Jacob Djoko Sarosa ketika pasukan tersebut melintas di jalan utama dari Laga ke Baucau. Batalion 745 sudah melakukan pembunuhan di Lautém sebelum memasuki Distrik Baucau. Dua saudara, Egas da Silva dan Abreu da Costa, pergi ke Desa Buruma dekat Kota Baucau dan memperingatkan para penduduk desa untuk tidak keluar ke jalan utama karena TNI sedang membunuh orang-orang.</p> |

* Pernyataan HVRD 5957. Pernyataan ini tampaknya mengatakan bahwa pembakaran rumah-rumah terjadi pada Agustus akan tetapi kejadian seperti ini lebih mungkin terjadi pada September.

| | |
|--------------------|---|
| | Dalam perjalanan mereka kembali ke Buile dengan mengendarai sepeda motor mereka berpapasan dengan konvoi Batalion 745. Mereka meloncat dari sepeda motor dan berusaha melarikan diri ke sawah namun mereka ditembak oleh anggota Batalion 745. Di Desa Buruma Lucinda da Silva dan Elisita da Silva ditembak mati, dan di Desa Caibada Victor Belo dan Carlos da Costa Ribeiro ditembak mati secara semena-mena.* |
| Venilale, Baucau | Pada 11 September sebuah kelompok gabungan TNI dan milisi Tim Sera, termasuk di antaranya Agustinho, menangkap Faustino dos Santos, seorang anggota klandestin. Dia diduga dibawa ke Baucau dan di sana dia dibunuh. ¹⁰⁹⁹ Keesokan harinya sebuah kelompok gabungan TNI dan Tim Sera dilaporkan menembak mati Francisco Guterres di Desa Uato Haco ketika dia sedang bekerja di sawah bersama istrinya. Istrinya mendengar para pelaku menuduh Guterres dan dirinya memberi makanan kepada tentara Falintil. ¹¹⁰⁰ |
| Atabae, Bobonaro | Sekelompok anggota milisi Halilintar di bawah pimpinan M203 dilaporkan membunuh Rui-Mau pada 15 September. ¹¹⁰¹ Milisi Halilintar juga membunuh seorang anggota klandestin, Estevão, di Desa Hataz (Atabae). ¹¹⁰² |
| Balibó, Bobonaro | Suatu waktu pada September milisi Halilintar dilaporkan membunuh seorang anggota klandestin, Francisco Nafan, di Sungai Badut Mean di Desa Batugade. ¹¹⁰³ Pada tengah malam 6 September, kelompok milisi Firmi, yang dipimpin oleh komandan M205, mengeluarkan delapan tahanan dari <i>residencia</i> di dalam benteng tua Balibó, yang menjadi markas besar dan pusat penahanan milisi tersebut. Kedelapan orang itu kemudian tidak pernah terlihat lagi. Para korban tersebut adalah Aleixo Paicheco, Francisco Maya, Patricio dos Santos, Cornelis Calouz, Gabriel dos Santos, Carlos de Carvalho, Benjamin Lucas, dan Francisco Paicheco. ¹¹⁰⁴ Pada 7 September seorang anggota TNI, Francisco dos Santos Laku, dilaporkan memberi perintah kepada Armindo dos Santos, Mário de Carvalho, dan anggota TNI lain untuk membunuh Celestino Fernando di sebuah pos pemeriksaan di jalan di luar Dusun Berame, Desa Balibó. Celestino Fernando kemudian dilaporkan dibawa ke sebuah sungai kering dan ditikam sampai mati oleh Armindo dos Santos dan Mário de Carvalho. ¹¹⁰⁵ Milisi Firmi diduga menculik tiga aktivis prokemerdekaan, termasuk Jorgé Mau Loe dan Elias Pires, dari rumahnya di Desa Leo Lima sekitar 10 September. Ketiganya ditahan di rumah komandan Firmi, João Oliveira, selama satu malam dan kemudian di rumah Marcos Leo Soro selama empat malam. Pada 15 September mereka dipindahkan ke Batugade oleh anggota Firmi, termasuk di antaranya wakil komandan Firmi, Joaquim Maia. Di sebuah tempat kosong di sisi jalan ke Atambua, Jorgé Mau Loe dan Elias Pires diduga ditikam sampai mati oleh anggota Firmi termasuk di antaranya Francisco Pedro (Geger), sementara orang ketiga berhasil melarikan diri. ¹¹⁰⁶ |
| Bobonaro, Bobonaro | Pada 5 September milisi Halilintar dilaporkan membunuh João Morais di Desa Oe Leu. ¹¹⁰⁷ Pada 10 September milisi dan anggota TNI menculik Lucinda Saldanha di Desa Lourba dan anggota TNI Paulino de Jesus diduga menemukannya dari belakang dan menewaskannya. ¹¹⁰⁸ Sekelompok anggota TNI termasuk di antaranya Paulino de Jesus, juga dituduh membunuh dua pendukung kemerdekaan, Egas Cardoso dan istrinya, Aliança de Jesus, di Lourba Leten, Desa Lourba pada 16 September. ¹¹⁰⁹ Halilintar dan Dadurus Merah Putih juga diduga membunuh Samuel Guterres, Marcelina de Jesus, dan Antonio Barreto di Lourba Leten pada 22 September karena keterlibatan mereka dengan Falintil. ¹¹¹⁰ |

* Mayat-mayat Egas da Silva, Abreu da Costa, Elisita da Silva, dan Victor Belo ditemukan tergeletak di rumahnya masing-masing dan direkam dalam video oleh wartawan Indonesia Agus Muliawan yang empat hari kemudian dibunuh oleh Tim Alfa di Lautém. Rekaman video para korban tersebut kemudian ditemukan dan digunakan dalam sebuah program dokumenter Jepang mengenai pembunuhan Agus Muliawan yang disiarkan pada 25 November 2000, "NHK Special – East Timor: Records of the Dark September."

| | |
|-------------------|--|
| | <p>Di Desa Ai Asasa, Afonso Pereira dan Armindo Guterres juga dilaporkan dibunuh pada 14 September oleh seorang anggota kelompok milisi pimpinan seseorang yang dikenal sebagai M217.¹¹¹¹</p> <p>Pada 14 September sekelompok anggota Hametin Merah Putih, termasuk di antaranya M219, M221 dan M223, dilaporkan membunuh Martina Maia.¹¹¹²</p> <p>Pada 20 September sekelompok anggota Hametin Merah Putih, termasuk di antaranya M225 dan M221, dilaporkan menculik Luis Maia di Desa Tebabui, membawanya ke Carabau dan membunuhnya di sana.¹¹¹³</p> <p>Di Desa Maliubu sekelompok anggota TNI dan milisi Halilintar dilaporkan membunuh Henrique de Araújo di depan rumahnya di Raimatete pada 16 September.¹¹¹⁴ Di Desa Cota Bo'ot, Florindo Cardoso Gomes asal Dili dilaporkan telah ditembak mati pada 16 September di tempat yang dikenal sebagai Hauba, di Cota Bo'ot, oleh TNI atau pihak yang dicurigai terkait dengan SGI (Satuan Gabungan Intelijen).¹¹¹⁵</p> <p>Manuel Xavier dilaporkan dibunuh oleh suatu kelompok milisi yang dikenal sebagai Koboï 55, kemungkinan nama lain untuk Harimau 55, pada 22 September.¹¹¹⁶</p> <p>José Godinho ditahan oleh anggota Koramil Bobonaro dan Hametin Merah Putih dan dilaporkan ditembak mati oleh seorang anggota Koramil Bobonaro pada 22 September.¹¹¹⁷</p> |
| Cailaco, Bobonaro | <p>Di September, dua bersaudara, Armando dan Quintilião, pergi ke Desa Meligo untuk mencari makanan dan dilaporkan ditahan oleh kepala desa tersebut. Mereka tidak ditemukan lagi setelah kejadian itu.¹¹¹⁸</p> <p>Pada 21 September anggota milisi Halilintar dilaporkan membunuh Daniel Leal di Airae, Desa Meligo, karena anaknya memberikan bantuan kepada Falintil.¹¹¹⁹</p> |
| Lolotoe, Bobonaro | <p>Pada 8 September anggota-anggota Kaer Metin Merah Putih yang dipimpin oleh komandan mereka, José Cardoso Ferreira (Mouzinho), membunuh Mariana da Costa dan Carlito Freitas di Sibi, Desa Opa.¹¹²⁰</p> <p>Pada 16 September anggota-anggota Kaer Metin Merah Putih dipimpin oleh José Cardoso Ferreira membunuh Agustoso Noronha dan Antonio Franca di Raimea, di Desa Opa.¹¹²¹</p> |
| Maliana, Bobonaro | <p>Pada 2 September para anggota TNI dan Dadurus Merah Putih mengepung kantor kelompok pemuda-pemudi Juventude Lorico Assuwain (JLA). Anggota-anggota Dadurus Merah Putih mulai melempari gedung tersebut dengan batu. Ketika anggota JLA membalas melempari batu ke jalan, anggota TNI melepaskan tembakan ke arah para anggota JLA. Mateus de Conceição ditembak oleh Sersan M227 [orang Timor] dua kali, dan Silvano Mali Talo juga ditembak. Mateus dibawa ke rumah seorang teman dan Silvano dibawa ke dalam kantor. Anggota Darah Merah Putih kemudian membakar kantor tersebut dengan Silvano yang masih berada di dalamnya. Mateus kemudian tewas pada hari itu juga dan jasad Silvano yang terbakar ditemukan pada Oktober di kantor JLA yang sudah hancur.</p> <p>Pada 7 September sekelompok anggota Halilintar, termasuk di antaranya M228, M229, dan M230, dilaporkan membunuh Ermino Xavier Viana, Venancio C é sar Mouzinho, Leoneto Gusmão Pereira, dan Martino de Fatima di Sungai Mesak di Desa Odamau. Kira-kira pada hari yang sama, anggota Halilintar, termasuk di antaranya João Maia dan Agustoso Asameta Tavares pergi ke Tapo Memo dan di sana João Maia,* dibantu oleh Agustoso, menemukan Paulino bersembunyi di atas langit-langit rumah dan menikamnya sampai mati dengan sebilah tombak.</p> |

* Kemungkinan João Maia. Milisi Halilintar João Maia juga terlibat dalam kasus pembunuhan Santara Tavares. Lihat Pernyataan HVRD 1164.

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>Halilintar dilaporkan juga bertanggung jawab atas pembunuhan Mario dos Santos di Nunura pada suatu waktu di September.</p> <p>Pada 7 September Dadurus Merah Putih membunuh setidaknya dua atau tiga orang di Mugis, Desa Odama. Dalam suatu insiden Dadurus Merah Putih dilaporkan membunuh Abilio Soares dan satu orang lainnya yang menolak pergi ke Timor Barat. Dalam kasus lainnya Dadurus Merah Putih dilaporkan membunuh Faustino Martins Mota.</p> <p>Sekitar 9 September, suatu kelompok yang terdiri atas 20 orang, termasuk di antaranya Sersan Frederico Pires, Kopral Romeu da Silva dari Kodim 1636, dan anggota Dadurus Merah Putih Baptista de Sousa berangkat menuju Genuhaan, Desa Odama. Di sana mereka melukai seorang anggota CNRT bernama Avelino Tilman, dan seorang pendukung kemerdekaan, Vitor dos Santos. Avelino Tilman tewas karena luka-lukanya sekitar 10 September. Sekitar 14 September, Baptista de Sousa dari Dadurus Merah Putih datang ke rumah tempat Vitor dos Santos tinggal dan setelah memerintahkan orang-orang yang tinggal di rumah itu keluar, Baptista masuk ke rumah tersebut dan menggorok leher Vitor dos Santos dengan parang.</p> <p>Sekitar 8 September, Dadurus Merah Putih juga dilaporkan membunuh Tito Franca Barros asal Lesu, Desa Memo, di Tunubibi. Pada 13 September milisi Dadurus Merah Putih membunuh dua orang yang melarikan diri dari kompleks Polres. Mereka telah kembali bersama keluarga mereka ke Rokon, sebuah <i>aldeia</i> di Holsa tempat mereka tinggal. Dalam sebuah pertemuan pada 13 September di Holsa yang dihadiri Sersan TNI Frederico Pires dan anggota milisi Dadurus Merah Putih lain, João Coli, Baptista de Sousa, dan lainnya sepakat untuk membunuh Francisco Terezão dan Lemos Guterres. Para anggota milisi menikam mereka sampai mati.</p> <p>Pada 21 atau 22 September sekelompok milisi Halilintar di bawah komando M295 dilaporkan membunuh pendukung Falintil, Manuel Moniz dan Casimiro Viana, di Beremau. Pada tanggal yang tidak diketahui di akhir September Manuel Gonsales Bere (<i>sic</i>), seorang anggota Dadurus Merah Putih, menikam sampai mati João Gonçalves dari Desa Lahomea di jembatan Nunura di kecamatan Maliana. Korban dicurigai sebagai seorang prokemerdekaan dan pendukung Falintil, dia ditangkap di Haikesak, Timor Barat.</p> |
| <p>Fatumean, Covalima</p> | <p>Pada 30 Agustus kelompok milisi Laksaur di Fatumean memulai pencarian terhadap tiga pendukung kemerdekaan, Raimundo de Oliveira, Martinho do Rêgo, dan Abel Pereira. Ketiganya—dua di antara mereka bersama istri masing-masing—melarikan diri ke Subdistrik Fohoren, namun semuanya ditangkap dan dibawa kembali ke markas milisi tersebut di Koramil Beluluik Leten (Fatumean). Pada 4 September mereka diduga dibunuh oleh Henrikus Mali dan dua anggota milisi Laksaur lain di markas milisi itu.</p> <p>Setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat sekelompok milisi Laksaur Fatumean di bawah pimpinan Henrikus Mali mulai mendaftar penduduk desa untuk dibawa ke Timor Barat. Kira-kira pada 5 September seorang pendukung kemerdekaan dari Manekiik, Desa Beluluik Leten, Agapito Amaral pergi bertemu dengan komandan peleton Laksaur di Fatumean, Yakobus Bere, dengan membawa golok di tangannya, karena dia tidak ingin keluarganya dibawa ke Timor Barat. Dia diduga ditembak di bagian perut oleh Yakobus Bere dan lehernya digorok oleh seorang anggota milisi atas perintah Yakobus Bere. Ibu Agapito Amaral, Rosalina Cardoso Belak, juga diduga dibunuh karena dia pergi ke pos milisi dan meneriaki dan memaki-maki para milisi karena membunuh anaknya.</p> <p>Pada 8 September seorang anggota TNI, Simão Nahak, diduga memerintahkan anggota TNI yang lain serta anggota milisi untuk membunuh anggota klandestin Suri Atok dan anak angkatnya José Ramos di Desa Dato Rua (Fohoren).</p> |

| | |
|-------------------|--|
| Zumalai, Covalima | <p>Milisi Mahidi dilaporkan menyerang sebuah kelompok yang terdiri atas sepuluh orang yang berusaha menghubungi Falintil dan membunuh Daniel Cardoso, Albru Amaral dan Francisco Ribeiro.</p> <p>Pada 10 September Luis da Conceição dilaporkan telah dibunuh di desa Zulo oleh seorang anggota kelompok paramiliter, Gadapaksi.*</p> <p>Di Fatuletu dua anggota milisi Mahidi membawa seorang anggota klandestin, Mateus Mota, dari rumahnya. Keberadaannya tidak diketahui lagi sejak kejadian itu.</p> |
| Suai, Covalima | <p>Sekitar 6 September Albino Nahak diduga telah dibawa oleh dua anggota kelompok milisi Laksaur, Baltazar Moruk dan Damião da Costa Nunes. Mayatnya belakangan ditemukan di tempat bernama Legore.†</p> <p>Sekitar 7 September Domingos Bau Koli (Domingos Andrade) dari Desa Kamenasa diduga telah dibunuh oleh anggota milisi Laksaur yang dipimpin oleh Olivio Tatoo Bau.</p> <p>Pada 8 September Olivio Tatoo Bau diduga membunuh Simplicio Doutel Sarmento yang sedang menuju Timor Barat dengan menikamnya di pos pemeriksaan di Salele.</p> <p>Pada 9 September anggota TNI Letnan Sugito, Komandan Koramil Suai, dan beberapa anggota milisi menahan lima orang pendukung kemerdekaan di Suai. Letnan Sugito serta komandan operasi milisi Laksaur, Alipio Gusmão, diduga telah memutuskan bahwa kelima orang itu harus dibunuh. Tiga dari kelima orang itu diduga ditembak oleh anggota Laksaur Americo Mali, dan lehernya juga digorok oleh anggota milisi Saulus. Paulus Ximenes dan Johanes Talu meninggal dalam serangan itu, namun orang yang ketiga bertahan hidup. Yang lain dilepaskan karena keduanya berkerabat dengan Eurico Guterres, komandan Aitarak.</p> <p>Pada atau sekitar 7 September, Alfredo Nahak, seorang anggota klandestin, ditangkap di pos pemeriksaan milisi di Suai, di bawah kekuasaan Olivio Tatoo Bau, dan dibawa ke Kodim. Keluarganya menemukan jasadnya di Fatukuan pada November.</p> <p>Pada 8 September Olivio Tatoo Bau dan Americo Mali, ketika sedang mengawasi sebuah pos pemeriksaan, memergoki Manuel Noronha dan menyeretnya keluar dari truk yang ditumpangnya. Beberapa lama setelah pembunuhannya, keluarga Manuel Noronha menemukan jasadnya.</p> <p>Elizario Martins dan Mateus Amaral dari Desa Kiar (Maucatar) pergi ke Kodim Suai setelah diperintahkan untuk berkumpul di sana sebelum dibawa ke Timor Barat. Karena mereka menolak untuk dibawa ke Timor Barat, mereka melarikan diri dari Kodim. Tidak berapa lama kemudian mereka tertangkap. Diduga atas perintah Letnan Sugito dan Olivio Moruk, Komandan Lakusar, mereka dibawa ke hutan dan kemudian dibunuh.</p> <p>Pada 26 September anggota milisi Laksaur di bawah komando Egidio Manek, termasuk di antaranya Silvestre Atai, diduga menyerang sebuah tempat di Hutan Wesei tempat warga desa bersembunyi, dan membunuh Domingos Barros. Silvestre Atai diduga telah memenggal kepala Domingos Barros.</p> <p>Dua pemuda yang dikenal dengan nama Mário dan Domingos, dilaporkan dibunuh di markas besar Mahidi di Beco, Kota Suai, pada 5 September. Dua orang yang dikenal sebagai José dan Quintinho dibunuh di Telkom, Kota Suai, pada 5 September. Felix Mali, seorang pemimpin kelompok klandestin Korenti Mate Fatin, di Debo, Suai Kota, dibunuh oleh Joanico Gusmão pada 5 September.</p> |

* Pernyataan HVRD 5207. 'Gada Paksi' di sini barangkali dipakai untuk mengacu kepada anggota milisi manapun.

† Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Damião da Costa Nunes, Perkara No. 01/2003, paragraf 21-25. Pendakwaan ini menyebutkan Legore sebagai desa.

| | |
|---------------------|---|
| | <p>Seorang perempuan yang dikenal sebagai Veronica dibunuh di Matai pada 9 September.</p> <p>Seseorang yang dikenal sebagai Paul dibunuh di Koramil Suai (1635-01) pada 9 September.</p> <p>Manuel Mali dibunuh di Kamanasa pada 10 September.</p> <p>Manuel Amaral Tilman dibunuh di Debos 11 September.</p> <p>Luis Amaral dibunuh di Debos 13 September.</p> <p>Terezinha Bete dibunuh di Kamanasa 24 September.</p> <p>Seorang pria yang dikenal bernama Lorenzo dibunuh di Debos pada 4 Oktober, dan seseorang yang dikenal sebagai Alcino dibunuh di Feras pada tanggal yang tidak diketahui.</p> <p>Komisi juga menerima informasi tentang penghilangan Ilizardo Martins asal Debos, Carlito Barros asal Lakorak, Moises Barros asal Kamanasa, Paulus Berbesin, Felix Amaral dan Marçal Amaral Corte Real asal D ebos, serta José Soares asal Wedare. Kebanyakan dari mereka menghilang pada September.</p> |
| Tilomar, Covalima | <p>Pada 15 September di Koramil Salele, Egidio Manek diduga telah memerintahkan 150 anggota milisi Laksaur, yang baru kembali dari Timor Barat, untuk menyerang lingkungan Kulit dan Aidere di Kota Suai. Mereka diminta menangkap semua warga desa dan membunuh mereka yang berusaha melarikan diri. Dalam penyerangan terhadap Aidere, Carlos Yosep dan Patricio de Jesus Ximenes, dibunuh.¹¹⁶²</p> <p>Pada 25 September anggota kelompok milisi Laksaur termasuk di antaranya Simão Nahak (TNI), Illidio Gusmão, Marcel Mendonça, dan Yosep Leki menyerang Hutan Wea tempat warga Desa Nikir bersembunyi, dan dalam serangan tersebut Titus Mali, Damião Ximenes, dan Januario Maia dibunuh.¹¹⁶³</p> <p>Dengan pola yang mirip, pada atau sekitar 26 September, anggota kelompok milisi Laksaur termasuk di antaranya Illidio Gusmão, Noberto Ximenes dan Yosep Leki menyerang sekelompok penduduk desa asal Wetabe yang bersembunyi di hutan Mudasikun, dan dalam serangan tersebut Paulino Cardoso dibunuh.¹¹⁶⁴</p> |
| Maucatar, Covalima | <p>Pada atau kira-kira 7 September, José dos Reis, yang menolak dibawa ke Timor Barat, diduga dibunuh oleh Damião da Costa Nunes dan anggota TNI, Simão Nahak, di jalan tidak jauh dari Desa Matai Maucatar.*</p> <p>Pada atau sekitar 9 September, Paulus Amaral dan Mário Martins, keduanya penduduk Desa Loho Rai, Matai, dibawa oleh anggota-anggota milisi Laksaur dan TNI, termasuk di antaranya Americo Sefan, Olivio Tadoo Bau, Henrikus Nahak, dan Paulus Berbosi. Mayat keduanya kemudian ditemukan mengambang di Sungai Loho Rai.¹¹⁶⁵</p> <p>Kelompok milisi yang sama melanjutkan aktivitasnya di Oktober. Tiga orang dari Desa Lookeu, Frederico Barros, Lorenzo Gusmão, dan Nazario Guterres diduga dibunuh oleh anggota kelompok tersebut.¹¹⁶⁶</p> |
| Fatululik, Covalima | <p>Sekitar 19 September anggota TNI, Simão Nahak, menciduk seorang pendukung kemerdekaan, José Pereira Coli, dari pos milisi Alastehen. Suatu waktu di Januari 2000 penduduk desa menemukan sisa-sisa tubuhnya dan menguburkannya.¹¹⁶⁷</p> <p>Sepanjang Oktober dua orang yang hanya dikenal sebagai Joni dan Anis dibawa dari Wemer, Desa Fatuloro, Subdistrik Fatululik. Mereka dilaporkan telah dibawa ke Atambua, Timor Barat, oleh anggota dari Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan kemudian dibunuh.¹¹⁶⁸</p> |

* Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Barat, surat dakwaan melawan Damião da Costa Nunes (Kasus. 1/2003) ayat 26-31; Pernyataan HRVD 7385. Surat Dakwaan ini mengatakan bahwa José dos Reis dibawa dari rumah di Desa Mota Air [sic] dan dibunuh dalam perjalanan ke Desa Maucatar. Matai adalah desa di Maucatar.

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>Dili Barat, Dili</p> | <p>Pada 1 September Guido Alves Correia, seorang anggota CNRT asal Mascarenhas, Dili, diduga telah dibunuh oleh anggota kelompok milisi Aitarak yang dipimpin oleh komandan kompi C Aitarak Beny Ludji.¹¹⁶⁹</p> <p>Pada 7 September Rui Abel dibunuh di Dare.¹¹⁷⁰</p> <p>Pada 13 September sekitar 20 anggota kelompok milisi Naga Merah dan TNI menangkap dan menembak mati Afonso Gonçalves di Bairro Pite karena mereka tidak dapat menemukan saudara laki-lakinya yang mereka cari.</p> <p>Sekitar 14 September, Francisco Besi Cano dipenggal di pos Aitarak Kampung Alor, Dili. Kepala desa Fatuhada, Mario Aitade, diduga hadir di lokasi tersebut.¹¹⁷¹ Armando Barros, seorang estafeta Falintil, lari dari Aileu ke Colmera di Dili di mana dia dikatakan telah dibunuh.¹¹⁷²</p> <p>Thomas Americo, asal Vila Verde, yang cukup dikenal sebagai seorang petinju yang sempat ambil bagian dalam pertandingan-pertandingan internasional atas nama Indonesia, dibawa masuk ke dalam sebuah mobil Kijang milik mantan kepala desa Hera di gedung ACAIT pada 7 September dan dibawa dengan mobil tersebut oleh anggota kelompok milisi Aitarak yang dipimpin oleh seseorang bernama M259. Americo tidak pernah terlihat lagi.¹¹⁷³</p> <p>Carlos Manuel da Silva dibawa dari markas Polda sekitar 10 September dan tidak pernah terlihat lagi.¹¹⁷⁴</p> <p>Pada 12 September Abilio Paicheco ditangkap, kemudian dibawa mula-mula ke markas besar Aitarak, di Hotel Tropical, dan kemudian ke pos Aitarak di Surik Mas. Dari sana dia dibawa ke Timor Barat. Dalam perjalanan ke Timor Barat dekat sungai Loes di desa Guico, subdistrik Maubara, menurut laporan dia diturunkan dari kendaraan dan diserahkan ke milisi Besi Merah Putih. Setelah itu dia diduga telah dibunuh.¹¹⁷⁵</p> |
| <p>Dili Timur, Dili</p> | <p>Pada 31 Agustus di Hera, seorang anggota CNRT, Mantus de Araújo, dan Martinho Vidal, anggota kelompok hak asasi manusia, Kontras, ditangkap dan dibawa ke rumah Mateus de Carvalho, komandan Kompi D dari milisi Aitarak. Mateus de Carvalho disebutkan telah meminta anak buahnya untuk 'berangkat dan laksanakan tugas kalian'. Kedua orang tersebut kemudian dibawa ke pos milisi di seberang rumah tersebut dan mereka dikatakan ditikam dan tewas akibat luka-luka mereka.¹¹⁷⁶</p> <p>Pada 1 September dilaporkan bahwa Marcelino Fausto de Oliveira diserang dan dibakar setelah disirami bensin oleh anggota kelompok milisi Aitarak di hadapan anggota Brimob dan TNI. Keluarganya menemukan mayatnya di rumah sakit di Toko Baru dan menguburnya di Matadouro.¹¹⁷⁷ Pada hari yang sama, João Xavier Fernandes, dilaporkan telah ditembak mati oleh anggota-anggota TNI dan tubuhnya dikuburkan di depan rumahnya.¹¹⁷⁸</p> <p>José Barbosa tewas setelah terkena peluru yang ditembakkan dari dalam mobil Kijang yang dikendarai oleh anggota milisi Aitarak di dekat perkuburan Cina di Taibessi.¹¹⁷⁹</p> <p>José Pinheiro dilaporkan telah dibunuh oleh seorang anggota kelompok milisi Aitarak dan seorang polisi di dekat Gedung Negara yang menjadi tempat tinggal Gubernur pada zaman Portugis.¹¹⁸⁰</p> <p>Pada 4 September Marcelo Agosto ditembak mati oleh anggota Besi Merah Putih dan kelompok milisi Aitarak di Masaur Debu, Becora.¹¹⁸¹</p> <p>Sekitar 4 September Luciano Sequira ditembak mati oleh anggota kelompok milisi Aitarak di Camea.¹¹⁸²</p> <p>Pada 6 September di Hera Domingos, Nunu Alves, setelah dituduh membantu Falintil, diduga telah ditembak mati oleh seorang prajurit TNI Antonio Pinto.¹¹⁸³</p> |

| | |
|------------------|---|
| Metinaro, Dili | <p>Antonio Fernandes ditangkap sekitar 5 September di Metinaro dan dibawa ke Polres, kemudian dia dilaporkan telah dibunuh.¹¹⁸⁴</p> <p>Pada 7 September, Antonio Saldanha Fernandes, kepala sekolah SMP di Metinaro dan anggota aktif CNRT, ditembak mati oleh seorang anggota TNI yang bernama José Soares, di Koramil. Komandan Koramil, Letnan Untung, berada di Koramil tersebut pada saat itu.¹¹⁸⁵</p> |
| Ermera, Atsabe | <p>Pada 31 Agustus di Desa Lasaun anggota Tim Pancasila, yang bertindak atas perintah dari anggota TNI, menangkap Manuel de Oliveira, seorang staf UNAMET, di pos pemungutan suara Lasaun. Kelompok milisi tersebut, termasuk di antaranya Agustino da Costa, memukul Manuel de Oliveira dengan membabitnya. Agustino da Costa diduga telah menembak mati Manuel de Oliveira.¹¹⁸⁶</p> <p>Juga di Lasaun, pada pertengahan September, seorang pendukung kemerdekaan bernama Domingos Remkulit dilaporkan ditembak mati oleh seorang anggota milisi.¹¹⁸⁷</p> |
| Hatulia, Ermera | <p>Di Hatulia kekerasan juga terjadi tidak lama setelah pemungutan suara. Pada 31 Agustus di Desa Manusea, komandan kelompok milisi Naga Merah, M265, diduga telah menikam Marcelo Soares sampai mati.¹¹⁸⁸</p> <p>M265 juga diduga telah menangkap José Martins pada September. José Martins kemudian dibawa ke Santa Cruz, Hatulia, di mana dia dilaporkan telah dibunuh.¹¹⁸⁹</p> |
| Railaco, Ermera | <p>Komandan Darah Merah, M266, dan komandan Naga Merah, M265, juga bertanggung jawab atas tewasnya seorang pegawai negeri sipil Kabupaten Ermera, Agustinho Soares dos Reis, pada 9 September di Bugasa Atas, Gleno.¹¹⁹⁰</p> <p>Anggota kelompok milisi Darah Merah, termasuk di antaranya Jakel dan Abrão Martins, membunuh seorang pemuda, Moises Soares, di Riamori, (Letefoho) pada September.¹¹⁹¹</p> <p>Komandan Darah Merah, M266, dan anggota milisi, M269, diduga bertanggung jawab atas kematian seorang pria bernama Ameu pada September di Desa Railaco Kraik.¹¹⁹²</p> |
| Lospalos, Lautém | <p>Di Desa Cacaven di bagian barat, Mateus Nunes dilaporkan telah dibunuh di sebuah pos TNI di desa tersebut, sekitar 9 September. Dia dilaporkan telah digorok lehernya dan tubuhnya dibuang ke dalam sumur.¹¹⁹³</p> <p>Di Desa Raça di daerah utara, Joaquim Ovimarais,¹¹⁹⁴ Antonio Oliveira,¹¹⁹⁵ Marito Berndanino, Paul, dan Serafim¹¹⁹⁶ dilaporkan telah dibunuh antara 10 dan 13 September. Dari pernyataan-pernyataan yang diterima, diduga anggota TNI yang ditempatkan di Mauloho, Desa Raça, telah terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan tersebut.</p> <p>Di Desa Fuioloro, di mana Batalion 745 ditempatkan, Martinho Branco, Marcelio Jeronimo, Julião de Azis, dan Helder de Azis ditangkap dalam persembunyian dan kemudian dibawa ke Poihoro, Fuioloro, dan diduga telah dibunuh, sekitar 13 September.¹¹⁹⁷ Aleixo Oliveira diduga telah dibunuh oleh seorang anggota Batalion 745 di belakang markas Batalion 745 pada 11 September.[*]</p> <p>Selain itu, antara 8 dan 10 September, tentara dari Batalion 745 diduga membunuh Antonio da Costa, Ambrosio Bernardino Alves, Julio de Jesus, Florencio Monteiro, dan Florentino Monteiro.¹¹⁹⁸</p> |

* Jaksa Penuntut Umum Timor-Leste, Pendakwaan terhadap Mayor Jacob Djoko Sarosa dan Letnan Camilo dos Santos, Kasus No. 2002/10, paragraf 35-40. Jaksa Penuntut Umum UNTAET, Dakwaan terhadap Joni Marques, et al., Kasus No. 2000/9, paragraf 26-28. Tetapi, keputusan Panel Khusus untuk kasus Kejahatan Berat, menyatakan bahwa penyebab kematian Aleixo Oliveira tidak bisa ditetapkan dengan bukti-bukti yang ada, oleh karena itu terdakwa dalam pembunuhan ini ditemukan tidak bersalah. Lihat Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, Keputusan, 11 Desember 2001.

| | |
|--------------------|--|
| | <p>Sejumlah pendukung kemerdekaan asal Fuiloro dibawa ke markas Kodim tempat mereka dieksekusi atau dihilangkan. Korban-korbannya antara lain adalah Afonso dos Santos,¹¹⁹⁹ Noberto da Luz Nato, João, Sikito, Olantino,¹²⁰⁰ Serpa Pinto, Jaime, Marito,¹²⁰¹ dan Francisco dos Santos¹²⁰². Sebagian dari mereka diduga dibuang ke dalam sumur di Sawarika, Fuiloro.¹²⁰³</p> |
| Moro, Lautém | <p>Di Subdistrik Moro, pembunuhan dilaporkan terjadi di Desa Parlamento, Lautém, dan Com di sepanjang pesisir utara.</p> <p>Pada 20 September tentara TNI, diduga berasal dari Batalion 745, menangkap Augusto Soares dan João Gomes dan menyiksa mereka sampai mati di pantai daerah Parlamento. Para korban datang ke pantai tersebut untuk mencari jalan untuk pergi ke Timor Barat.¹²⁰⁴ Jasad kedua korban tersebut dan korban ketiga, Amilcar Barros, diduga telah dibakar di belakang gudang beras Dolog di Kota Lautém.¹²⁰⁵</p> <p>Pada 21 September, ketika sekelompok orang mencari makan di kebun kelapa di Kampung Ira-ara, Desa Parlamento, mereka berpapasan dengan sekelompok anggota milisi Tim Alfa, termasuk di antaranya Joni Marques, komandan Tim Alfa* dan anggota Kopassus, dan Paulo da Costa. Anggota kelompok milisi tersebut melepaskan tembakan ke arah orang-orang itu, dan kemudian Joni Marques diduga menembak mati Alfredo Araújo, dan Paulo da Costa diduga menembak mati Calisto Rodrigues.¹²⁰⁶</p> <p>Di Com, João Viela meninggalkan sebuah gua di Luaira, di mana dia dan keluarganya bersembunyi, untuk mencari air, namun tidak pernah kembali. Dia kemudian ditemukan telah tewas. Istrinya mendengar bahwa dia telah ditembak, walaupun tidak diketahui siapa yang menembaknya.¹²⁰⁷</p> <p>Benedito Marques Cabral asal Moro juga diduga telah dibunuh oleh sekelompok anggota Tim Alfa, termasuk di antaranya José Valente, ketika dia turun dari gunung untuk mencari makanan.¹²⁰⁸</p> |
| Bazartete, Liquiça | <p>Di Desa Metagou pada 3 September sekelompok anggota TNI dan anggota BMP menangkap sejumlah penduduk desa tersebut, termasuk di antaranya Jacinto dos Santos, Pedro Alves, dan Francisco da Silva karena mereka diduga menjadi pendukung CNRT. Keesokan harinya ketiganya dibawa ke belakang sekolah tempat penduduk desa lainnya sudah diperintahkan untuk menggali lubang-lubang kuburan. Ketiganya kemudian dieksekusi satu per satu oleh para anggota milisi, termasuk di antaranya Anastacio Martins dan Domingos Gonçalves (Domingos Liman Sanak). Para penduduk desa diperintahkan segera menguburkan mereka setelah eksekusi tersebut.¹²⁰⁹</p> <p>Pada 5 September sekelompok anggota BMP, sekali lagi termasuk di antaranya Anastacio Martins dan Domingos Gonçalves, pergi ke Muka Bera dan membakar rumah-rumah di sana. Mereka kembali ke desa tersebut pada 7 September dan diduga membunuh tiga pendukung kemerdekaan, Paulo Gonçalves, Guilherme Gonçalves, dan Clementino Gonçalves.[†]</p> |
| Maubara, Liquiça | <p>Bruno Cardoso dilaporkan dibawa ke pos BMP di Aliatu, Lubulogor, Desa Gugleur pada 6 September dan dibunuh.¹²¹⁰</p> |
| Manatuto, Manatuto | <p>Armando da Cunha asal Desa Maabat dilaporkan diculik pada 5 September dan setelah beberapa hari dia dilaporkan ditembak mati oleh seorang anggota TNI.¹²¹¹</p> <p>Pada 8 September Filipe Soares dibawa dari Polres lama, tempat dia mencari perlindungan bersama banyak orang lainnya, dan dilaporkan ditembak mati oleh pemimpin milisi Mahadomi M274.¹²¹²</p> |

* Tim Alfa juga dikenal sebagai Jati Merah Putih.

† Pernyataan HVRD 0919; 0957 menyebut lokasi yang bernama Buku merah, sementara di dalam Pendakwaan Jaksa Penuntut Umum UNTAET terhadap Anastacio Martins dan Domingos Gonçalves (Perkara No. 11/2001), tempat ini disebutkan sebagai Muka Bera di para. 34-45.

| | |
|-------------------|---|
| | <p>Pada 11 September Francisco Gusmão ditembak mati oleh seorang anggota TNI di Manatuto ketika dia mencari makanan bersama 20 orang lainnya.¹²¹³</p> <p>Pada tanggal yang tidak diketahui Atai da Costa dilaporkan dibawa ke pantai di desa Sau dan dibunuh di sana oleh para pemimpin milisi M275 dan M276.¹²¹⁴</p> <p>Pada 11 September para anggota TNI dan Mahadomi menyerang lebih daripada 100 penduduk sipil dari Desa Maabat yang bersembunyi di gunung sekitar Kakurut Liden. Dalam penyerangan tersebut Antonio Pinto ditembak mati.</p> <p>Pada 13 September koordinator CNRT di Desa Sau, Nazario Lino Pereira Belo, tertangkap di jembatan Manatuto oleh para anggota milisi Mahadomi dan dibawa ke pos milisi di Manatuto, di mana diduga mereka menikam dia sampai mati.</p> <p>Pada 16 September aktivis klandestin Sebastião da Costa dibunuh di pantai di Manatuto setelah ditahan di kompleks TNI.¹²¹⁵</p> |
| Laclo, Manatuto | <p>Pada 7 September anggota Mahadomi, ketika berpatroli bersama anggota TNI di Laclo, dilaporkan membunuh Jacinto Correia, Gilberto Madai, Domingos Carceres, dan Danré Carceres.¹²¹⁶</p> <p>Di Wehau, Aniceto Santos dilaporkan ditangkap dan ditembak mati oleh seorang petugas polisi¹²¹⁷ dan Aleixo da Cunha ditusuk hingga tewas.¹²¹⁸</p> |
| Soibada, Manatuto | <p>Mauleki dilaporkan ditembak di kakinya dan kemudian ditusuk sampai tewas dengan sebilah pisau oleh anggota TNI ketika sedang bekerja di kebunnya.¹²¹⁹</p> |
| Same, Manufahi | <p>Sekitar 3 September atas perintah pemimpin milisi Ablai Guilhermino Marçal, anggota milisi menangkap Bendito Moniz di rumahnya di Letefoho,[*] membawa dia ke markas Ablai di Same dan membunuh dia di situ.¹²²⁰</p> <p>Pada 9 September Lorenço Tilman dibunuh, diduga oleh João Sarmento dan Benjamin Sarmento, karena dia menolak menaiki truk yang akan membawanya ke Timor Barat.¹²²¹</p> <p>Pada 9 September João da Silva bersama dengan warga Fahlulan, Holarua, turun dari gunung untuk mencari makanan dan berpapasan dengan truk yang membawa anggota Kopassus dan Ablai di Fatu Maromak, Holarua. Mereka ditembak dan João da Silva terkena tetapi tidak langsung tewas. Atas perintah seorang anggota Kopassus di atas truk, seorang anggota milisi, Clementino Alves, menusuk João da Silva hingga tewas.¹²²²</p> <p>Pada 12 September, ketika anggota kelompok milisi Ablai membakar rumah-rumah di Ailule, Letefoho, seorang warga desa yang sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, Lorenço da Costa, tewas terbakar.¹²²³ Lorenço da Costa dilaporkan berteriak minta dibawa keluar tetapi tidak ada yang menolong.¹²²⁴</p> <p>Pada 16 September sekelompok anggota milisi Ablai dilaporkan membunuh seorang pendukung kemerdekaan, Marcelino Verdial, di depan putrinya yang baru berusia delapan tahun.¹²²⁵</p> <p>Pada 24 September empat orang dibunuh oleh sekelompok anggota TNI dan Ablai, yang dipimpin oleh Letnan TNI Sumino, di Desa Betano.¹²²⁶ Kelompok ini sedang dalam perjalanan kembali ke Betano dari Atambua untuk memberangkatkan lagi orang-orang ke Timor Barat dan semua pembunuhan ini terjadi saat mereka kembali ke Betano. Empat orang yang dijadikan sasaran oleh kelompok ini ternyata bukan orang-orang yang dikenal sebagai aktivis prokemerdekaan. Florindo Pereira Soares, seorang pria berpenyakit jiwa, ditemukan, ditangkap, dan ditusuk hingga tewas.¹²²⁷</p> |

* Menurut Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Nazario Vital dos Santos Corte Real et al.: "Benedito Moniz pulang ke rumahnya di kampung Letefo [sic], desa Holarua untuk mengambil barang-barangnya." (Perkara No. 13/2004 para 52). Letefoho dan Holarua adalah dua kampung berbeda di Subdistrik Same.

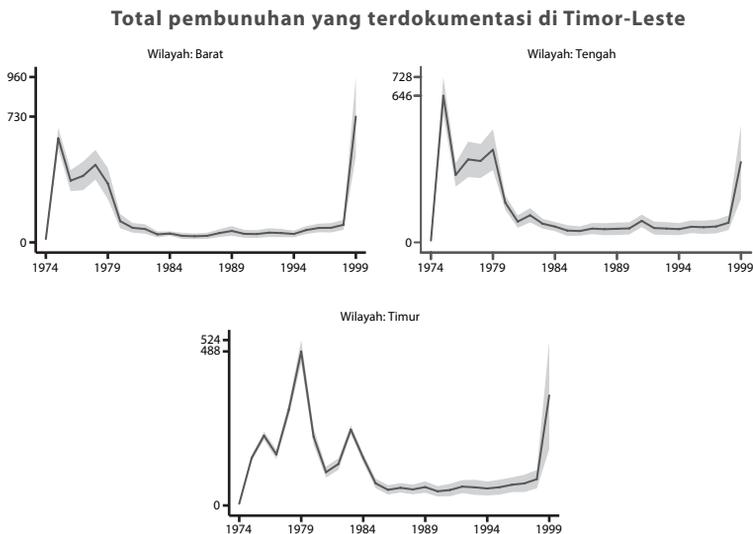
| | |
|------------------|--|
| | <p>Marten Gaspar Soares ditemukan, dikejar, dan ditembak di dadanya oleh Letnan Sumino sendiri. Remezio da Costa diberhentikan dan ditembak dari belakang ketika sedang diajak bicara.¹²²⁸ Akhirnya Egas Monis Tilman ditemukan, dikejar, ditusuk, dan ditembak.</p> |
| Betano, Manufahi | <p>Suatu waktu di September sekelompok anggota Ablai dipimpin oleh Babinsa Betano, Mohammad Ruri, dan anggota Kopassus, Gualter Vidigal, membakar rumah-rumah di Desa Betano. Guilhermino Tilman berhasil merangkak keluar walaupun kedua kakinya cacat. Tetapi dia menderita luka bakar yang parah dan tiga hari kemudian tewas.¹²²⁹</p> |
| Oesilo, Oecussi | <p>Setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat, TNI dan kelompok milisi di Passabe berencana mengadakan serangan besar-besaran terhadap lokasi yang dicurigai sebagai markas prokemerdekaan di Subdistrik Oesilo.¹²³⁰ Pada 7 September, di sebuah pertemuan di markas besar Kodim, sekelompok milisi diperintahkan untuk menyerang desa-desa sekitar Passabe dan Oesilo. Simão Lopes, pemimpin umum kelompok milisi Sakunar, akan memimpin satu kelompok untuk menyerang desa-desa sekitar Passabe. Laurentino Soares (Moko) akan memimpin penyerangan lainnya terhadap desa-desa sekitar Oesilo. Kelompok yang dipimpin oleh Simão Lopes berjalan ke Nibin, Desa Usitakeno, dan di sana mereka dilaporkan membunuh kepala desa prokemerdekaan, Armando Sani.¹²³¹</p> <p>Sebuah kelompok milisi yang dipimpin oleh Quelo Mauno, dilaporkan membunuh Domingos Kolo di <i>aldeia</i> Nitas, desa Usitakeno. Kelompok milisi juga membakar rumah-rumah dan membunuh hewan ternak milik warga desa.</p> <p>Kelompok ini kemudian menyerang Quibiselo, Bobo Manat, dan dalam penyerangan itu Victor Punef, Yacobus Siki, Yosep Non i Maknaun, Agustusino Ulan, Zacharias Ena, Mikhael Sasi, Yacobus Oki dan Jose Siki dibunuh. Menurut sebuah pernyataan, Quibiselo diserang dari empat penjuru, Pure, Noel Ekate, Imbate (Timor Barat), dan Passabe.¹²³² Setelah menghancurkan Kampung Quibiselo, kelompok yang dipimpin oleh Simão Lopes meneruskan perjalanan ke Tumin, Bobo Manat.</p> <p>Sementara itu, kelompok yang dipimpin oleh Laurentino Soares juga menyerang Tumin, membakar rumah, dan membunuh ternak. Menurut sebuah pernyataan, Tumin diserang dari tiga penjuru.¹²³³ Pada penyerangan ke Tumin, Marcos Sufa Afoan, Filippus Tualaka, Laurentino Ulan Cono, Agustusino Neno, Naub Lape, Alberto Afoan, Nenu Catu, Ciprianus Anin, dan Francisco Elu dibunuh. Dalam serangan terhadap tiga desa ini, 18 warga desa dibunuh.</p> <p>Pembantaian terhadap kurang lebih 47 pemuda dari desa-desa ini terjadi pada 10 September di salah satu tempat di Subdistrik Passabe.</p> <p>Banyak pembunuhan lain dilaporkan terjadi di Oesilo. Para korban termasuk empat saudara, yakni Bon Afoan, Paul Ase, Kusi One, dan Punef Bonat,¹²³⁴ Francisco Kefi,¹²³⁵ Firmino Nahak,¹²³⁶ Sufa Tabun¹²³⁷, Neno Katu¹²³⁸, Francisco Sani, Francisco Sanan, dan Cipriano Kono.¹²³⁹ Paulo Sequeira, ketua <i>aldeia</i> Pune, Desa Usi Tasai, dan seorang anggota CNRT, serta seorang pendukung CNRT lain di desa itu, Stanislaw Bala, juga diduga dibunuh oleh sekelompok anggota TNI termasuk di antaranya Jorgé Ulan, João Gomes, dan Blasus Manek pada 11 September.¹²⁴⁰</p> |
| Passabe, Oecussi | <p>Kelompok milisi Sakunar di Naetuna, Desa Abani, termasuk di antaranya Umbertus Ena (alias Mala Cloe) membakar rumah-rumah di Nakome pada atau sekitar 9 September.</p> |

* Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Quelo Mauno, Perkara No. 03/2003, para. 10-22. Menurut paragraf 14: "Domingos Kolo bersama keluarganya tinggal di kampung Nitas, Desa Nibin."

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>Satu atau dua hari kemudian, kelompok milisi yang sama kembali ke Nakome dan memerintahkan penduduk desa untuk berkumpul di depan salah satu rumah yang tidak terbakar. Anggota milisi mengepung penduduk desa sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri, kemudian mulai melempari mereka dengan batu. Anggota milisi mengambil sasaran tiga orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan, Ernesto Lafu, Serafim Tolo, dan Vicente Quelo (Mala Quelo). Mereka menyerang ketiganya dengan parang berulang-kali. Ernesto Lafu dan Vicente Quelo tewas karena luka-luka yang mereka derita.¹²⁴¹</p> |
| Nitibe, Oecussi | <p>Pada atau sekitar 16 September sekelompok anggota milisi Sakunar dipimpin oleh Laurentino Soares (Moko) menyerang Desa Usi Taco, membakar banyak rumah, dan dilaporkan membunuh Lazaro Bano, Celestino Cab, dan Seni Tui Anin.¹²⁴²</p> <p>Pada hari yang sama di Desa Lela Ufe, Leonardo Anin dan Antonio Beto dilaporkan dibunuh. Anin adalah seorang Hansip yang juga seorang aktivis CNRT dengan tanggung jawab intelijen. Beto juga seorang anggota CNRT.¹²⁴³</p> <p>César Guterres dilaporkan telah dibunuh oleh anggota Kodim Kefamenanu di Timor Barat, di Desa Bene Ufe di September.¹²⁴⁴</p> <p>Silvester Saco dilaporkan dibunuh di September di Suni Ufe.</p> <p>Kemudian pada 20 Oktober di Suni Ufe, Umberto Taek dan Berta Bala dilaporkan dibunuh karena dicurigai sebagai anggota CNRT.¹²⁴⁵</p> |
| Pante Makassar, Oecussi | <p>Antara 22 dan 28 September nama-nama berikut dilaporkan dibunuh pada penyerangan oleh anggota milisi atau TNI: Maria Au,¹²⁴⁶ En Labi,¹²⁴⁷ Antonio Hunu,¹²⁴⁸ Oscar Francisco da Costa,¹²⁴⁹ João Eko, Fagundo Bano, Leovigildo Bano,¹²⁵⁰ Ambrosio Bobo,¹²⁵¹ Angelo Caet,¹²⁵² Tuin Cab,¹²⁵³ Ernesto Cab,¹²⁵⁴ dan Tolo Cusi.¹²⁵⁵ Luis Cofitalan dan Domingos Vaz dilaporkan dibunuh di Lifau di Oktober,¹²⁵⁶ dan Neon Colo, Puin Tanessi, dan Neon Sufa dibunuh di sawah di Letefoho, Desa Lifau.¹²⁵⁷</p> <p>Selain pembantaian di dalam atau sekitar <i>aldeia</i> Maquelab, Taiboco pada 20 Oktober, yang sudah dibahas di atas, ada lagi suatu kejadian pada 22 Oktober, saat Interfet mencapai Oecussi. Sekelompok kecil milisi Sakunar, sekitar 12 orang, dipimpin oleh M292, masuk <i>aldeia</i> Nus Lao, Bobocasa, dan menangkap Francisco Anton, Frimino Anton, dan Marcelino Cono. Kelompok milisi ini dilaporkan membawa ketiganya ke Desa Naimeco dan membunuh mereka di sana.¹²⁵⁸</p> |
| Lacluta, Viqueque | <p>Pada 10 atau 11 September Jeronimo de Carvalho dilaporkan telah dibunuh oleh seorang pria bernama Antonio atau Amtuno di Desa Dilor (Lacluta). Pelaku menyamar menjadi orang gila, mendekati korban, dan memukul kepalanya dengan tongkat kayu. Dia kemudian kabur ke hutan.¹²⁵⁹ Dia dilaporkan belakangan mengakui dalam sebuah penyelidikan oleh kelompok prokemerdekaan bahwa dia telah menerima uang dari anggota milisi dan TNI untuk melaksanakan pembunuhan itu.¹²⁶⁰</p> <p>Pada 26 September Sirilio Bosco, seorang anggota CNRT, dilaporkan dipukuli sampai mati. Dia dan empat orang lainnya hendak bertemu dengan komandan Falintil di Kadoras dan tertangkap oleh sekelompok yang terdiri atas lima orang.¹²⁶¹</p> <p>Komisi juga menerima laporan mengenai pembunuhan para pendukung kemerdekaan di Desa Dilor (Lacluta), pada 10 atau 11 September, dan kemudian pada 26 September¹²⁶².</p> |
| Ossu, Viqueque | <p>Pada 11 September pendukung kemerdekaan Manuel Carvalho dilaporkan ditembak mati oleh anggota kelompok milisi Naga Merah di Desa Builale.¹²⁶³</p> |

Temuan-temuan

888. Berdasarkan analisis data kuantitatif yang dikumpulkan melalui proses pengambilan pernyataan dan sensus batu nisan, Komisi menemukan bahwa sekitar 18.600 orang Timor-Leste nonpetempur (dengan margin kesalahan +/-1.000) terbunuh atau hilang selama periode konflik.



Sumber: Perhitungan dari HRVD, RMS, dan perkiraan pembunuhan di GCD (oleh Komisi)
Tanggal perhitungan: 21 April 2005

889. Komisi menemukan bahwa angka tertinggi pembunuhan dan penghilangan terhadap nonpetempur terjadi antara 1975 dan 1983, dan pada 1999. Mayoritas terbesar dari semua pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa yang didokumentasikan melalui proses pengambilan pernyataan Komisi, dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, termasuk juga oleh pasukan pembantu mereka: 57% dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia; hampir sepertiga, 32%, dilakukan oleh pasukan pembantu mereka di bawah kendali pasukan keamanan Indonesia.*

890. Komisi menemukan bahwa gerakan Resistansi juga melakukan pembunuhan di luar hukum dan penghilangan selama periode konflik. Dari semua pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi melalui proses pengambilan pernyataan, 29,6% dihubungkan dengan para anggota gerakan Resistansi.

* Pasukan pembantu ini terdiri atas kelompok "Pertahanan sipil" (termasuk Hansip, Ratih, Wanra, dan Kamra), para anggota pemerintah setempat, kelompok-kelompok paramiliter (seperti Tonsus dan berbagai "Tim" yang merupakan pendahulu dari kelompok-kelompok milisi yang terbentuk pada 1998-99), dan kelompok-kelompok milisi itu sendiri.

891. Penghilangan dalam skala besar terjadi pada 1979-1980 di wilayah-wilayah Timur dan Tengah, dan pada 1983-1984 di wilayah Timur. Dari semua penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi, 70% dihubungkan dengan pasukan keamanan Indonesia dan 27% dihubungkan dengan para pasukan pembantu dari militer Indonesia.

892. Meskipun pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab untuk sebagian besar pelanggaran fatal yang berlangsung di bawah kendalinya, Komisi mencatat bahwa orang Timor-Leste, baik bertindak sendiri maupun sebagai anggota pasukan keamanan Indonesia, terlibat dalam melakukan lebih daripada seperempat kejahatan-kejahatan ini.

Konflik Internal, 1974-1976

893. Komisi menemukan bahwa banyak faktor yang tidak menguntungkan saling berkaitan meningkatkan kekerasan yang tidak terkendali selama periode konflik internal. Faktor-faktor ini antara lain:

- Kelambanan Portugal dalam membuat jadwal dekolonisasi yang disetujui secara luas.
- Indonesia makin campurtangan secara terbuka dalam masalah-masalah wilayah ini.
- Kegagalan semua aktor internasional yang sesungguhnya dapat menghalangi Indonesia dengan menegaskan tanpa ragu-ragu bahwa pengambilalihan secara paksa oleh Indonesia terhadap Timor Portugis akan merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima oleh prinsip hak penentuan nasib sendiri.
- Kurangnya pengalaman partai-partai politik yang baru terbentuk, termasuk ketidakdewasaan mereka dalam memberikan toleransi terhadap kekerasan.
- Pembentukan dan tindakan mempersenjatai milisi yang berafiliasi dengan partai-partai politik
- Pengabaian netralitas politik oleh para anggota tentara dan polisi kolonial, baik para anggota orang Timor-Leste maupun orang Portugis.
- Kegagalan unsur-unsur penegak hukum Pemerintah Portugal untuk mengatasi pecahnya kekerasan dalam peningkatan ketegangan sebelum dan sesudah 11 Agustus 1975.

894. Komisi mencatat bahwa sejumlah kecil lembaga di wilayah ini, yang dapat memainkan peran penengah dan memajukan dialog, termasuk Gereja Katolik, gagal melakukan hal itu. Sebaliknya mereka berpihak dan mengibaskan api konflik.

895. Komisi menemukan bahwa perbedaan-perbedaan komunal yang telah tertanam, yang kadang disebabkan oleh kepentingan ekonomi dan pribadi, ikut memengaruhi kondisi politik dalam bulan-bulan sebelum konflik bersenjata internal. Karena partai-partai politik saling bertikai demi kekuasaan setempat, melalui intimidasi, pidato-pidato yang menyerukan kekerasan, dan kekerasan itu sendiri, iklim politik terbentuk untuk pembunuhan dan pembunuhan balas dendam yang merupakan

ciri konflik bersenjata internal pada Agustus-September 1975. Kehidupan politik di seluruh wilayah ini dirusak dengan cara demikian, namun Distrik Liquiça, Ermera, Manatuto, Aileu, dan Manufahi adalah distrik yang paling terkena dampak.

896. Komisi menemukan bahwa aksi Indonesia sejak 1974 merupakan penyumbang utama terhadap keterpurukan dari situasi yang sebelumnya sudah tidak stabil. Aksi-aksi ini berpuncak pada serbuan pada September-November 1975 dan invasi besar-besaran pada 7 Desember 1975 di mana Indonesia memanfaatkan dan memperburuk perpecahan di antara orang Timor-Leste dengan menggalang kekuatan-kekuatan anti-Fretilin untuk bergabung dalam agresinya terhadap wilayah ini. Pembunuhan para tahanan, yang telah menonjol dalam konflik di Agustus dan Oktober 1975, muncul lagi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Desember 1975-Januari 1976, saat Fretilin membunuh para tahanan sebagai tanggapan terhadap mendekatnya pasukan Indonesia.

UDT

897. Komisi menemukan bahwa:

1. Para anggota dan pendukung UDT melakukan pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa terhadap para warga sipil di Dili, Ainaro, Liquiça, Ermera, dan distrik lain setelah melancarkan gerakan bersenjata pada 11 Agustus 1975. Sebagian besar korban adalah para anggota dan pendukung Fretilin. Beberapa korban adalah penonton yang tak bersalah yang terbunuh menggantikan anggota Fretilin yang berhasil melarikan diri dan orang yang kurang beruntung berpapasan dengan sekelompok pendukung bersenjata UDT.
2. Para anggota dan pendukung UDT melakukan pembunuhan di luar hukum antara Agustus dan Oktober 1975, dengan menjadikan mereka yang dicurigai sebagai anggota Fretilin di Liquiça, Dili, Ermera, Manatuto, Manufahi, Bobonaro, Oecussi, dan distrik lainnya sebagai sasaran. Peningkatan yang tajam dalam jumlah pelanggaran fatal oleh UDT terjadi ketika terdesak oleh gerak maju Fretilin..
3. Para pemimpin, anggota, dan pendukung UDT membunuh orang-orang yang diidentifikasi berhubungan dengan Fretilin dalam berbagai situasi. Segera setelah dilancarkannya gerakan bersenjata, para pendukung Fretilin ditangkap, dibunuh, dan kadang dipenggal di Manufahi, Liquiça, dan Ermera, kadang oleh gerombolan UDT yang bertindak atas perintah para pemimpin mereka. Para sipir penjara yang membunuh orang-orang yang ditahan di pusat-pusat penahanan UDT, kadang atas inisiatif mereka sendiri sebagaimana terjadi di Palapaço (Dili), dan kadang atas perintah para pemimpin partai sebagaimana terjadi di Aifu, Ermera. Di akhir Agustus dan awal September 1975, orang-orang yang ditahan setelah UDT melancarkan gerakan bersenjatanya, dibunuh di Manufahi dan Ermera saat pasukan Fretilin mendekati wilayah-wilayah ini.

4. Korban dari pembunuhan di luar hukum oleh UDT ini umumnya adalah laki-laki berusia dinas militer yang dicurigai atau memang bersekutu dengan Fretilin. Namun, Komisi juga menerima laporan-laporan tentang adanya anak-anak di antara kelompok-kelompok tahanan yang dibunuh.
5. Cara-cara pembunuhan di luar hukum meliputi:
 - Kelompok-kelompok bersenjata dari para anggota UDT menembak kelompok-kelompok para warga sipil tak bersenjata
 - Pembunuhan terhadap para warga sipil dengan menggunakan senjata tradisional, seperti parang, tombak, dan pisau.
 - Pelaksanaan upacara ritual sebelum dan setelah pembunuhan
 - Pemenggalan dan pemajangan kepala yang terpenggal sebagai trofi
 - Pemotongan anggota tubuh, seperti tangan, dan pengeluaran isi perut
 - Pemajangan jenazah di depan rumah para anggota Fretilin
 - Pembuangan mayat atau tubuh yang terluka parah di tebing atau sungai
 - Pembunuhan tahanan di pusat penahanan, dan di tempat terpencil di pedalaman, termasuk di perkebunan kopi. Sejumlah tahanan diikat tangannya dengan kawat pada saat dibunuh. Sejumlah yang lainnya dibawa keluar dari pusat penahanan dalam kelompok kecil dan kemudian dibunuh.
 - Pemukulan sebelum pembunuhan
 - Penghilangan
6. Komisi tidak yakin bahwa Komite Sentral UDT memerintahkan pembunuhan terhadap para warga sipil, termasuk pembunuhan para tahanan. Namun, Komite Sentral UDT berkontribusi terhadap iklim di mana pembunuhan tersebut mungkin terjadi, dengan menghasut para pengikut mereka lewat radio untuk menangkap para lawan politik sebagai bagian dari pembersihan terhadap para “komunis”. Namun, Komisi mempelajari bahwa anggota perorangan dari Komite Sentral UDT berperan langsung dalam menghasut kekerasan pada tingkat distrik. Anggota Komite Sentral UDT yang lain mengetahui bahwa para komandan UDT, para anggota UDT, dan pasukan UDT melakukan pembunuhan di luar hukum, sebagaimana terbukti dengan usaha-usaha sporadis yang dilakukan beberapa dari mereka untuk menghentikan terjadinya pembunuhan.

Fretilin

898. Komisi menemukan bahwa :

7. Sebelum aksi bersenjata UDT pada 11 Agustus, para anggota dan pendukung Fretilin maupun UDT melakukan serangan sporadis terhadap desa-desa lawan, di mana para warga sipil terbunuh. Serangan-serangan ini lebih sering terjadi di wilayah Laclubar (Manatuto), Turiscai (Manufahi), dan Maubisse (Ainaro). Serangan yang paling hebat adalah serangan Fretilin

terhadap Desa Maulau (Maubisse, Ainaro) di mana sekitar 40 orang, kebanyakan pendukung UDT, terbunuh.

8. Tanggapan Fretilin terhadap aksi bersenjata UDT pada 11 Agustus adalah “pemberontakan umum” bersenjata, di mana para anggota Fretilin secara di luar hukum membunuh para pemimpin, anggota, dan pendukung UDT dan partai lawan lainnya. Antara Agustus dan Oktober 1975 para anggota dan pendukung Fretilin melakukan pembunuhan balas dendam di luar hukum dengan jumlah korban yang melampaui korban pembunuhan oleh UDT.
9. Korban dari pembunuhan-pembunuhan di luar hukum oleh Fretilin ini umumnya adalah laki-laki berusia dinas militer yang dicurigai atau memang bersekutu dengan UDT. Pada tingkatan yang lebih rendah, di sejumlah wilayah Timor-Leste, para pemimpin, anggota, dan pendukung Apodeti juga menjadi sasaran.
10. Para anggota dan pendukung Fretilin melakukan pembunuhan sporadis terhadap para tahanan, baik secara perorangan maupun dalam kelompok, di Distrik Aileu dan Liquiça, dalam aksi bersenjata UDT selama seminggu. Di antara mereka yang dibunuh terdapat para petempur dan warga sipil. Ada sejumlah kejadian di mana para pemimpin Fretilin setempat menghentikan pembunuhan terhadap para tahanan, termasuk di Distrik Liquiça dan Manufahi.
11. Para pemimpin Fretilin memerintahkan pemindahan tahanan dari Dili dan wilayah lainnya ke Aileu pada September, Oktober dan Desember 1975. Saat pasukan Indonesia mendekat, situasi keamanan memburuk, menimbulkan suasana ketakutan yang tak terkendali dan kemarahan yang hebat terhadap mereka yang dipandang sebagai kolaborator atau mungkin berkolaborasi dengan pasukan invasi. Ratusan tahanan dibunuh oleh pasukan Fretilin di Aileu, Maubisse (Ainaro), dan Same (Manufahi) pada Desember 1975-Januari 1976. Komisi percaya bahwa pembunuhan-pembunuhan ini, sejumlah di antaranya adalah pembunuhan massal, mengakibatkan jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada korban dalam periode-periode awal konflik internal.
12. Cara-cara pembunuhan di luar hukum ini antara lain:
 - Serangan mematikan sebagai bagian dari serbuan terhadap komunitas yang menerima dukungan dari partai lawan
 - Pemukulan sebelum pembunuhan
 - Penembakan menggunakan Mauser, G-3, dan senjataapi lainnya
 - Membuang tubuh korban dengan melemparkan ke dalam rumah yang terbakar
 - Kurangnya perawatan terhadap tahanan yang terluka
 - Pemenggalan kepala
 - Diikat ke tiang bendera, disuruh berbaris, atau diikat untuk dibunuh

- Serangan mematikan dengan menggunakan senjata tradisional, seperti parang, tombak, dan pisau
- Melemparkan granat ke dalam ruang tertutup dan tahanan ditahan

13. Meskipun pembunuhan di luar hukum dilakukan oleh para anggota dan pendukung Fretilin adalah balas dendam terhadap aksi kekerasan yang lebih dahulu dilakukan oleh UDT, para pemimpin Fretilin gagal mengendalikan pasukannya dalam rangka mencegah pelanggaran yang berakibat fatal di seluruh wilayah.

ABRI/TNI

899. Komisi menemukan bahwa:

14. Operasi-operasi intelijen rahasia Indonesia, kontak tingkat tinggi dengan para pemimpin partai politik Timor-Leste, dan latihan militer di Timor Barat menambah peningkatan ketegangan di antara partai-partai politik, dan dapat sangat menentukan dalam keputusan UDT untuk melancarkan aksi bersenjata.
15. Operasi-operasi militer rahasia Indonesia bertanggung jawab secara langsung terhadap pembunuhan di luar hukum terhadap puluhan warga sipil di Distrik Bobonaro, Covalima dan Ermera pada Agustus-November 1975. Latihan yang diberikan oleh anggota militer Indonesia di Timor Barat kepada para anggota Apodeti dan UDT dan penyebaran para “Partisan” ini bersama dalam pasukan Indonesia dalam serbuan pada Agustus-November 1975 dan selama serta setelah invasi besar-besaran pada 7 Desember 1975 memperburuk permusuhan antara Fretilin dan partai-partai lainnya, dan dengan demikian memainkan bagian dalam pembunuhan-pembunuhan Fretilin terhadap orang-orang yang berkaitan dengan UDT dan Apodeti sebelum dan setelah invasi.

ABRI, UDT, dan Apodeti

900. Komisi menemukan bahwa:

16. ABRI menggunakan para anggota UDT, Apodeti, dan partai lainnya dalam berbagai peran selama dan setelah invasi, termasuk menggunakan mereka sebagai pasukan pembantu, penerjemah, informan, dan pelaksana administrasi. Para anggota dan pendukung UDT dan Apodeti yang direkrut dan dilatih oleh militer Indonesia membantu dan menyokong oleh ABRI dalam tugas pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa selama dan setelah invasi.

Pendudukan Indonesia 1975-1999

Gerakan Resistansi

901. Komisi menemukan bahwa:

17. Gerakan Resistansi juga melakukan pembunuhan di luar hukum dan penghilangan selama keseluruhan periode antara invasi Indonesia dan selama keseluruhan periode konflik. Selama periode ini kurang dari sepertiga, 29%, dari semua pembunuhan di luar hukum dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi melalui proses pengambilan pernyataan, dilakukan oleh pasukan yang berafiliasi dengan gerakan Resistansi. Tambahan lagi, pelanggaran-pelanggaran ini lebih banyak berlangsung dalam tahun-tahun awal konflik. Walaupun 49% (561/1.145) dari pembunuhan dan penghilangan yang terdokumentasi pada 1975 dihubungkan dengan Fretilin/Falintil, pembunuhan-pembunuhan dan penghilangan ini menurun menjadi 16,6% (563/3.398) dalam periode 1976-84 dan terus menurun selama tahun-tahun akhir konflik menjadi 3,7% (18/488) dari pembunuhan dan penghilangan pada 1985-98, dan menjadi 0,6% (5/898) pada 1999.

902. Komisi mendengarkan kesaksian yang luas tentang pembunuhan terhadap para nonpetempur yang dilakukan oleh Fretilin dan Falintil selama periode Februari 1976-79. Selama periode ini para pemimpin dan anggota dari kedua organisasi ini terlibat dalam pelanggaran fatal di hampir semua distrik di seluruh wilayah ini. Para pemimpin senior Fretilin dan para komandan Falintil memerintahkan banyak pembunuhan yang dilaporkan kepada Komisi, dan dalam beberapa peristiwa mereka sendiri melakukan pembunuhan. Meskipun beberapa dari mereka yang terbunuh adalah warga sipil yang sebelumnya berhubungan dengan UDT dan Apodeti, yang bekerjasama dengan Indonesia, sebagian besar mereka yang terbunuh, dihilangkan, atau meninggal sebagai akibat dari deprivasi atau jenis penganiayaan yang lainnya selama periode ini adalah anggota Fretilin atau Falintil sendiri, atau anggota penduduk sipil yang tinggal di basis Fretilin.

903. Antara 1980 dan 1999 tidak hanya tingkat pembunuhan oleh Fretilin yang dilaporkan jauh lebih rendah daripada pembunuhan pada 1976-79; tapi pola pembunuhannya juga sangat berbeda dari yang terjadi pada periode-periode awal. Para korban cenderung bukan orang-orang yang berhubungan dengan gerakan Resistansi, melainkan perorangan yang bekerjasama dengan Indonesia (kadang bertentangan dengan kehendak mereka) dan korban serampangan dari serangan-serangan Falintil.

904. Komisi mendengar tentang sejumlah pembunuhan yang dilakukan oleh Fretilin sesudah Februari 1976 sampai 1979 terhadap orang-orang yang berhubungan dengan partai-partai lain, hampir semua korban diketahui Komisi berhubungan dengan UDT. Pembunuhan cenderung terjadi di wilayah-wilayah seperti Distrik Ermera, Baucau, dan Manatuto, tempat dukungan UDT maupun Fretilin sama-sama kuat dan tingkat kekerasan selama “perang saudara” telah menjadi sangat hebat.

905. Dalam beberapa kejadian para anggota UDT dibunuh oleh anggota Fretilin biasa yang dimotivasi oleh rasa dendam. Dalam kejadian lain, seperti pembunuhan terhadap setidaknya sembilan orang di Venilale (Baucau) antara 1 dan 12 Februari 1976, ada bukti keterlibatan dari tingkat yang lebih tinggi. Komisi juga menerima laporan tentang pembunuhan para mantan anggota UDT yang dicurigai menjadi mata-mata Indonesia dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dibunuh karena dituduh telah berhubungan dengan sanak keluarga yang berafiliasi dengan UDT di wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia.

906. Komisi menemukan bahwa:

18. Pada 1976-77 sekitar 60 orang dibunuh atau meninggal dalam penahanan, sebagai akibat dari konflik dalam tubuh gerakan Resistansi. Pembunuhan-pembunuhan ini termasuk:

- Aquiles Freitas, komandan Komando Bero-Quero di Quelicai (Baucau), dan sejumlah pemimpin yang bersekutu dengannya, termasuk Ponciano dos Santos, Antonio Freitas, dan João Teodoso de Lima, dibunuh di Lobito (Vemasse, Baucau) dan di Baguia (Baguia, Baucau) dalam Desember 1976-Januari 1977.
- Francisco Ruas Hornay dan setidaknya 14 pengikutnya dibunuh di Iliomar (Lautém) pada November 1976
- Mantan Wakil Kepala Staf Falintil, José da Silva, dan sekitar 40 pengikutnya, yang dibunuh atau meninggal dalam penahanan antara Oktober 1976 dan Agustus 1977 setelah ditahan di Distrik Ermera pada Oktober 1976

19. Dalam konflik internal Fretilin yang meledak pada 1977 beberapa ratus pengikut dan yang dicurigai sebagai pengikut Presiden Fretilin, Francisco Xavier do Amaral, dibunuh atau meninggal dari penyiksaan dan penganiayaan dalam penahanan. Pembersihan terpusat di Aileu dan Manufahi di Sektor Utara Bagian Tengah dan Sektor Selatan Bagian Tengah, dan pada skala yang lebih rendah di Quelicai di Distrik Baucau dan Uato Carbau dan Uatulari di Distrik Viqueque di Sektor Timur Bagian Tengah dan Covalima dan Ermera di Sektor Selatan Bagian Depan dan Sektor Utara Bagian Depan. Mereka yang menjadi sasaran termasuk anggota Komite Sentral Fretilin, komandan militer senior, dan kader level menengah Fretilin dan organisasi-organisasi tempat mereka berafiliasi dan juga anggota Fretilin biasa, pasukan Falintil, dan anggota penduduk sipil yang tinggal di basis-basis Fretilin.

20. Banyak korban dari pembersihan ini meninggal dalam kondisi yang mengerikan, termasuk:

- Dalam pembunuhan massal di depan umum yang dilaksanakan dengan kekejaman luarbiasa.
- Sebagai akibat dari deprivasi luarbiasa dalam pusat penahanan yang sangat primitif, yang mencakup tempat penahanan di dalam Renal (Pusat Rehabilitasi Nasional), di mana makanan, tempat berlindung,

sanitasi, dan perawatan medis yang diberikan kepada para tahanan sangat tidak memadai.

- Sebagai akibat dari penyiksaan yang kejam dalam penahanan, melibatkan cara-cara seperti pembakaran dengan besi panas, pemukulan berulang-ulang, menggantung korban di pohon, dan memotong bagian-bagian tubuh korban.

907. Komisi menemukan bahwa:

21. Para pemimpin senior Fretilin tidak hanya mengetahui dan menyetujui praktik-praktik ini, yang umumnya terjadi pada atau dekat basis Komite Sentral Fretilin dan administrasi Sektoral dan Zona, tetapi dalam banyak peristiwa mereka sendiri adalah pelaku langsung.
22. Selain pembunuhan dan kematian yang berhubungan dengan konflik politik dalam tubuh Fretilin, ada juga keadaan lain di mana Fretilin/Falintil melakukan pelanggaran-pelanggaran ini. Di antara kategori-kategori korban yang dilaporkan kepada Komisi telah dibunuh atau meninggal akibat kekurangan atau karena jenis penganiayaan lainnya selama berada dalam penahanan, adalah:
 - Warga sipil yang dicurigai berencana menyerahkan diri, dalam tahap menyerahkan diri, atau yang telah menyerah
 - Para pemimpin atau anggota Fretilin atau Falintil setempat yang telah menganjurkan warga sipil untuk menyerah
 - Orang-orang yang terpisah dari konsentrasi utama penduduk dan ditangkap
 - Para tawanan yang dibunuh saat pasukan Indonesia mendekati wilayah tempat mereka ditahan
 - Warga desa yang dicurigai atau memang menjadi bagian dari partai “prointegrasi” dibunuh saat pasukan Indonesia mendekat sebuah wilayah
 - Orang-orang yang mempunyai pandangan ideologis yang bertentangan
 - Orang-orang yang setelah menyerah diperintahkan oleh ABRI, Hansip, atau anggota pemerintahan sipil untuk kembali ke pegunungan atau hutan untuk mencoba membujuk orang-orang yang masih bertahan agar menyerah
 - Orang-orang yang kembali bergabung dengan gerakan Resistansi setelah sebelumnya menyerah atau ditangkap oleh Indonesia
 - Keluarga para kolaborator dan para kolaborator sendiri
 - Orang-orang yang disalahkan karena kegagalan penyerangan Falintil atas basis-basis Indonesia atau karena keberhasilan serangan Indonesia atas basis-basis Fretilin dan Falintil
 - Orang yang tinggal di basis-basis Fretilin, yang telah berhubungan dengan pihak keluarga atau orang lain di wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia

- Orang-orang yang tinggal di basis-basis gerakan Resistansi, di bawah kekuasaan Indonesia, atau di wilayah-wilayah yang tidak sepenuhnya dikuasai kedua belah pihak, yang tertangkap saat mencari makanan atau sedang mengerjakan pekerjaan sehari-hari mereka

908. Walaupun mengakui ketegangan hebat yang diakibatkan oleh serangan-serangan tanpa pandangbulu dari pihak Indonesia terhadap basis-basis mereka, terutama dalam periode-periode 1976-79, Komisi menganggap para pemimpin Fretilin/Falintil pada saat itu bertanggung jawab dalam menciptakan situasi kekerasan dan intoleransi berbasis ideologi yang menyediakan prasyarat bagi terjadinya sejumlah besar pembunuhan. Tambahan pula, Komisi menemukan bahwa para pemimpin dan komandan Fretilin/Falintil bertanggung jawab memerintahkan atau terlibat secara langsung melakukan sejumlah pembunuhan ini.

1980-1999

909. Antara 1980 dan 1999 terjadi penurunan yang tajam dalam jumlah pembunuhan yang dihubungkan dengan Fretilin/Falintil. Karena masyarakat Timor-Leste menjadi sangat termiliterisasi sepanjang periode ini, status dari banyak warga sipil yang dibunuh oleh Fretilin/Falintil sering ambigu. Mereka ini termasuk orang-orang yang secara paksa ditempatkan dalam posisi yang merugikan, baik sebagai Hansip, sebagai orang-orang yang direkrut secara paksa sebagai TBO (Tenaga Bantuan Operasi) atau untuk mengambil bagian dalam berbagai Operasi Kikis, orang-orang yang diwajibkan melakukan tugas jaga malam, atau direkrut dalam kelompok-kelompok milisi di luar keinginan mereka. Komisi percaya bahwa tanggung jawab terhadap kematian dalam kondisi ini harus terutama dibebankan kepada mereka yang menempatkan korban dalam posisi merugikan tersebut, yaitu pasukan keamanan Indonesia. Selain itu banyak juga korban pembunuhan Falintil adalah Hansip, kepala desa, dan para anggota pemerintahan sipil lainnya, yang memegang posisi yang, tidak sebagaimana layaknya di sebagian besar wilayah Indonesia, telah menjadi sangat termiliterisasi di Timor-Leste yang diduduki ini.

910. Karena batas antara petempur dan nonpetempur sering kabur dan karena tidak selalu jelas dari informasi yang tersedia bahwa korban tertentu adalah sasaran yang dimaksudkan, Komisi tidak selalu dapat menentukan, berdasarkan informasi yang tersedia, apakah pelanggaran benar-benar telah terjadi, dan jika memang terjadi, kepada siapakah tanggung jawab harus dibebankan.

911. Kecenderungan menurunnya pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh gerakan Resistansi, yang terutama terjadi selama dekade terakhir pendudukan Indonesia, dapat dijelaskan oleh beberapa perkembangan yang berkaitan. Sebuah kebijakan baru diambil, menggeser fokus perjuangan menjadi protes perkotaan. Meskipun Falintil tetap hidup dan mampu secara militer, pergeseran kebijakan ini lebih memberikan keutamaan kepada protes publik di kota-kota daripada taktik yang sebelumnya disukai Falintil yaitu menunjukkan bahwa Falintil adalah kekuatan harus diperhitungkan melalui unjuk kekuatan di wilayah perdesaan. Kecenderungan ini dipercepat oleh keputusan Indonesia pada akhir 1988 untuk

“membuka” sebagian Timor-Leste kepada orang-orang luar. Pada saat yang sama, keputusan untuk mengejar strategi Persatuan Nasional dan untuk membangun seluas mungkin basis dukungan untuk gerakan Resistansi, termasuk dengan membujuk orang Timor-Leste yang bekerjasama dengan Indonesia, mungkin berkontribusi kepada berkurangnya kekerasan dalam tahun-tahun ini. Sebagai bagian dari strategi ini, pada 1987, tentara Resistansi, Falintil, dipisahkan dari Fretilin.

912. Selama periode 1980-98, Falintil membunuh warga sipil dalam situasi sebagai berikut:

- Selama serangan terhadap permukiman yang dikuasai militer pada awal 1980-an, yang tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan kepada penduduk yang berada di bawah kekuasaan Indonesia bahwa Falintil tetap hidup
- Selama operasi-operasi militer Indonesia di mana orang Timor-Leste direkrut ke dalamnya, biasanya secara paksa
- Selama serangan-serangan terhadap desa-desa pada pertengahan 1980-an, yang tampaknya merupakan tanggapan terhadap operasi-operasi utama Indonesia dan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Falintil tetap menyimpan kekuatan militer untuk melancarkan serangan-serangan seperti itu; para penjaga desa dan Hansip terutama menjadi yang paling mudah terbunuh dalam insiden-insiden seperti ini
- Selama serangan-serangan yang dilancarkan pada saat-saat tertentu, termasuk perayaan-perayaan (seperti Perayaan Hari Kemerdekaan dan perayaan berdirinya Falintil) dan selama pemilihan umum nasional (1987 dan 1997), saat serangan-serangan ini diharapkan menarik perhatian secara internasional dan di Indonesia dan Timor-Leste

913. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi dalam konteks operasi militer dan sebagaimana dicatat di atas, Komisi sering menemui kesulitan untuk menentukan apakah warga sipil yang terbunuh dalam kondisi ini secara khusus menjadi sasaran.

914. Ada kejadian pembunuhan bersasaran yang dilaporkan selama periode ini, di mana, sebagai contoh, Falintil membunuh warga sipil yang diperintahkan oleh ABRI/TNI untuk mencari sanak keluarga di hutan, ketika Falintil membunuh anggota Hansip dan para kolaborator lainnya dan sebelum dan setelah Jajak Pendapat pada 1999. Dalam beberapa kasus, Komisi menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa Komandan Tertinggi Falintil tidak secara kelembagaan memaafkan pelanggaran-pelanggaran ini.

Pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantunya

915. Komisi menemukan bahwa:

23. Para anggota pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantu mereka melakukan dan memaafkan pembunuhan-pembunuhan di luar hukum yang sistematis dan meluas dan penghilangan-penghilangan paksa selama periode pendudukan Indonesia terhadap Timor-Leste.

24. Dari semua pembunuhan di luar hukum dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi melalui proses pengambilan pernyataan, sekitar 70% (4,174/5,944) dihubungkan dengan militer dan polisi Indonesia dan pasukan pembantu mereka, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama.

Tabel 56: Perkiraan jumlah pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan Indonesia dan para pasukan pembantunya

| Pelanggaran oleh: | Militer dan polisi Indonesia & pasukan pembantu mereka, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama | Pasukan pembantu bertindak sendiri | Militer & polisi Indonesia bertindak sendiri | Militer dan polisi Indonesia bertindak secara bersama-sama dengan pasukan pembantu mereka |
|--------------------------|---|------------------------------------|--|---|
| Semua pelanggaran | 71,917 84,40% | 14,704 17,30% | 43,323 50,90% | 13.550 15,90% |
| Pembunuhan di luar hukum | 3.455 67,60% | 835 16,30% | 1.972 38,60% | 630 12,30% |
| Penghilangan | 719 86,30% | 105 12,60% | 494 59,30% | 120 14,40% |

25. Pasukan keamanan Indonesia, bertindak tanpa pasukan pembantu mereka, bertanggung jawab atas sebagian besar pembunuhan atas warga sipil selama masa pendudukan, selama 1975, 1979, dan 1983. Tingginya jumlah pembunuhan ini bersamaan dengan periode operasi militer besar-besaran, di mana ribuan orang mengalami penahanan, pemindahan, dan kekurangan makanan.
26. Pasukan pembantu yang terdiri atas orang-orang Timor-Leste yang bertindak tanpa para anggota pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab atas sejumlah yang lebih kecil daripada warga sipil yang terbunuh selama periode pendudukan, selama tahun 1975, 1979, 1983. Namun, para pasukan pembantu yang bertindak tanpa para anggota pasukan keamanan Indonesia ini bertanggung jawab atas sebagian besar pembunuhan warga sipil pada 1999, selama Jajak Pendapat. Hal ini menunjukkan perubahan dalam strategi pasukan keamanan Indonesia yang mempersenjatai, melatih, dan memimpin kelompok-kelompok milisi untuk melakukan pembunuhan di luar hukum dan pemindahan paksa atas nama mereka.
27. Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa oleh pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantu mereka terjadi di ke-13 distrik, dengan jumlah tertinggi yang tercatat di distrik-distrik bagian timur.
28. Para korban dari pembunuhan di luar hukum dan pemindahan paksa terutama adalah laki-laki berusia dinas militer dengan hubungan yang nyata atau terduga dengan kelompok-kelompok yang menentang pendudukan, termasuk Fretilin/Falintil, jaringan klandestin, atau kelompok prokemerdekaan lainnya. Perempuan dan anak-anak yang disangka

merupakan anggota keluarga dari mereka yang disebutkan di atas juga menjadi korban dari pelanggaran fatal ini dalam tingkat yang lebih rendah. Perempuan dan anak-anak yang terbunuh dalam pembantaian khususnya disebabkan karena penembakan dan penyerangan tanpa pandangbulu yang menyebabkan sejumlah besar korban jiwa.

29. Pasukan keamanan Indonesia dan para pasukan pembantu mereka menggunakan penghilangan paksa sebagai strategi untuk mengontrol kegiatan aksi bersenjata balasan, khususnya di wilayah timur dan tengah. Strategi ini terutama sangat efektif dalam menanamkan ketakutan dalam masyarakat umum, mengganggu kehidupan keluarga korban.

1975-1984

30. Pasukan-pasukan Indonesia bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum dan pemindahan paksa terhadap para warga sipil selama invasi terhadap Timor-Leste. Di Dili ratusan warga sipil dibunuh, tampaknya merupakan balas dendam terhadap kematian para prajurit Indonesia. Hampir semua pembunuhan ini terjadi pada 7-9 Desember di tempat-tempat seperti Colmera, Vila Verde, Matadouro, dan sepanjang Sungai Maloa ke Ailok Laran, tempat pasukan Fretilin giat melawan pasukan invasi. Puluhan warga etnik Cina yang tinggal di sekitar Colmera dibunuh dekat pelabuhan, sebagaimana juga para pemimpin dan anggota Fretilin yang tertangkap dan sanak keluarga mereka, termasuk Isabel Barreto, istri Nicolau Lobato, Wakil Presiden Fretilin dan Perdana Menteri RDTL.
31. Komisi menerima banyak laporan tentang pasukan Indonesia yang membunuh para warga sipil saat pasukan Indonesia maju ke bagian lain dari Timor-Leste. Kadang mereka yang terbunuh dilaporkan sebagai anggota Fretilin, tetapi banyak juga korban dari pembunuhan-pembunuhan ini adalah penduduk sipil yang menjadi sasaran serampangan. Warga sipil biasa menjadi sasaran dalam berbagai macam situasi: saat mencari makanan atau sedang keluar untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari, bertemu dengan pasukan keamanan Indonesia yang sedang beroperasi, sebagai pembalasan terhadap serangan Falintil, dan karena dicurigai bekerjasama atau mengetahui tentang Fretilin/Falintil.
32. Sepanjang tahun-tahun awal pendudukan, khususnya antara 1978 dan 1979, para komandan ABRI/TNI, pasukan, dan pasukan pembantu mereka melakukan pembunuhan di luar hukum dan pemindahan paksa yang sistematis dan meluas terhadap para warga sipil dan petempur yang menyerah.

916. Selain pembunuhan terhadap perorangan dan kelompok kecil, pasukan keamanan Indonesia dan para pasukan pembantunya melakukan serangkaian pembunuhan dan penghilangan yang luas dan sistematis yang ditujukan kepada para anggota Fretilin dan Falintil yang menyerah atau tertangkap. Komisi menemukan bahwa pembunuhan dan penghilangan ini dilakukan sebagai bagian dari rencana sistematis, yang direncanakan pada level tertinggi dari struktur komando militer

dan dikoordinasi oleh Korem yang baru terbentuk di bawah komando saat itu, Kolonel Adolf Sahala Rajagukguk, yang bertujuan menyingkirkan para pemimpin gerakan Resistansi yang masih hidup. Komisi mencapai kesimpulan ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Pembunuhan-pembunuhan dan penghilangan paksa ini terjadi di berbagai tempat yang berbeda pada saat yang hampir bersamaan, dan berakibat pada pembunuhan atau penghilangan sekurang-kurangnya 600 orang antara Maret sampai September 1979.
- Sasaran dari pembunuhan dan penghilangan ini terutama adalah orang-orang yang sebelum menyerah atau tertangkap adalah aktivis Fretilin, meskipun sering bukan seseorang yang secara khusus memegang posisi senior dalam organisasi, atau anggota Falintil, juga meskipun sering bukan seorang komandan.
- Waktu-waktu tertentu saat pembunuhan dan penghilangan ini terjadi adalah periode transisi saat Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja dihentikan dan digantikan oleh Komando Resort Militer Timor Timur, saat yang dimaksudkan untuk menandai normalisasi keadaan di Timor-Leste.
- Banyak dari mereka yang menjadi korban dari pembunuhan dan penghilangan ini telah ditangkap atau menyerah jauh sebelum mereka dibunuh atau dihilangkan, dan dalam beberapa kasus dimasukkan ke dalam satuan pasukan pembantu Indonesia, seperti Tonsus dan Hansip, atau pemerintahan sipil.
- Dalam beberapa distrik tempat pembunuhan dan penghilangan berlangsung, Komisi mengetahui bahwa telah dibuat daftar orang-orang yang menjadi sasaran.
- Perlakuan terhadap para korban adalah sama: hampir semua korban ditahan dalam pusat penahanan tertentu dan dari sana mereka dibawa ke tempat eksekusi tertentu, tempat mereka dibunuh oleh unit militer atau pasukan pembantu tertentu.
- Komisi juga menemukan bahwa seorang tahanan yang akhirnya akan dibunuh dapat dikirimkan dari satu tempat penahanan ke tempat penahanan lainnya, kadang ke distrik lain, sebelum dibunuh. Ini merupakan suatu indikasi adanya koordinasi secara menyeluruh.
- Indikasi lain akan adanya koordinasi adalah sejumlah besar lembaga yang terlibat dalam pembunuhan dan penghilangan para tahanan, termasuk satuan-satuan struktur teritorial mulai dari Korem sampai Koramil, batalion tempur, dan Resimen Tim Tempur yang secara regional mengomandoi mereka, Hansip, tim-tim paramiliter seperti Tim Nuklir dan Tonsus, dan pegawai sipil.
- Pembunuhan ini secara luas diketahui waktu itu baik oleh para tahanan sendiri maupun oleh masyarakat luas dan dirasakan baik oleh para tahanan maupun masyarakat sebagai aksi luas yang terkoordinasi.

- Bahasa yang digunakan oleh para pelaku di distrik-distrik yang berbeda untuk menerangkan penghilangan para korban sering seragam, di mana tahanan dibawa untuk dibunuh digambarkan sebagai “pergi mandi” atau “pergi sekolah”.
- Sepanjang pendudukan, para komandan dan pasukan ABRI serta pegawai sipil secara paksa merekrut puluhan ribu warga sipil untuk terlibat dalam operasi militer, yang dikenal sebagai Operasi Kikis, untuk mencari dan menghancurkan pasukan Resistansi yang masih tersisa di pegunungan. Operasi yang terbesar berlangsung pada Juni-September 1981, di mana sebanyak 60.000 orang Timor-Leste direkrut untuk menemukan posisi Falintil.

917. Komisi menemukan bahwa pada September 1981, pada akhir Operasi Kikis pada Juni-September 1981, Batalion 321, 744, dan/atau 745, satuan-satuan Marinir, dan pasukan Hansip menyerang pasukan Falintil yang berkumpul di wilayah Gunung Aitana di perbatasan antara Manatuto dan Viqueque dan kemudian membunuh lebih daripada seratus orang dan mungkin beberapa ratus pasukan Falintil dan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak yang bersama mereka. Pada saat mereka dibunuh, para korban ini sedang berada dalam kekuasaan pasukan Indonesia atau sedang ditahan setelah menyerah atau tertangkap.

918. Sepanjang pendudukan, khususnya pada awal 1980-an, para komandan ABRI/TNI, pasukan, dan pasukan pembantu melakukan pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa yang meluas dan sistematis terhadap para warga sipil untuk menghukum masyarakat secara kolektif yang dicurigai mendukung pasukan Falintil. Penghukuman secara tak pandang bulu terhadap orang-orang yang diketahui sebelumnya terlibat dalam gerakan Resistansi dan penghukuman kolektif terhadap komunitas sangatlah berat menyusul serangan Falintil terhadap sasaran militer. Sebagai contoh:

- Setelah gerakan Resistansi melancarkan serangan terhadap sasaran-sasaran militer di Marabia dan Becora di Dili pada 10 Juni 1980, ratusan orang ditahan. Komisi menyusun nama 121 orang yang hilang, dibunuh (kadang di depan umum), atau meninggal dalam tahanan karena penyiksaan berat dan kekurangan makanan dan perawatan medis dalam minggu-minggu setelah penyerangan itu. Nama-nama ini tidak termasuk mereka yang dipilih untuk dikirim ke Pulau Ataúro antara Juli 1980 dan Agustus 1981 karena dituduh terlibat dalam penyerangan. Kondisi orang-orang ini, yang termasuk kelompok pertama yang dikirim ke Ataúro sejak invasi, sangat buruk dan diketahui bahwa banyak dari mereka meninggal di pulau ini.
- Setelah serangan Falintil atas Mau Chiga (Hato Bulico, Ainaro) dan Rototo (Same, Manufahi), di wilayah Gunung Kablaki pada 20 Agustus 1982, para pasukan dan komandan dari Kodim Ainaro, Koramil Dare, dan Batalion Zeni Tempur 5 (Zipur 5) dan Hansip menahan ratusan laki-laki dan perempuan dari Mau Chiga dan masyarakat sekitarnya. Sebuah proyek khusus yang dilakukan oleh Komisi mencatat bahwa lebih daripada 50 orang dari Desa

Mau Chiga sendiri dibunuh atau dihilangkan dalam beberapa bulan setelah itu. Banyak di antara mereka dibunuh dengan cara yang sangat kejam, baik di depan umum maupun di tempat eksekusi yang disebut Jakarta 2, di Builo, dekat kota Ainaro, tempat para korban dilemparkan ke dalam jurang yang dalam. Yang lainnya diperkosa dan sekitar 600 orang dari wilayah ini dipindahkan secara paksa ke Pulau Ataúro dan ke wilayah lainnya, tempat banyak dari mereka meninggal karena deprivasi.

- Setelah serangan bersama Falintil dan Ratih (Rakyat Terlatih) di Kraras (Viqueque) pada 8 Agustus 1983, pasukan dan para komandan Kopassandha, Kodim Viqueque, Batalion 328, 501, 745, dan Hansip, melakukan serangkaian pembunuhan, di mana lebih daripada 200 warga sipil terbunuh, kebanyakan di antaranya laki-laki, yang telah melarikan diri dari desa itu dan bersembunyi di berbagai tempat di sekitar Kraras, dalam bulan-bulan September-Oktober 1983.
- Setelah pembelotan lebih daripada 30 anggota Hansip bersenjata, bersama keluarga mereka dan anggota kelompok pemuda klandestin di Mehara (Lautém) pada 9 Agustus 1983, pembelotan berskala kecil di Lore di Subdistrik Lospalos (Lautém) dan Serelau di Subdistrik Moro (Lautém), dan diketahuinya rencana untuk aksi serupa di Iliomar, pasukan keamanan Indonesia menahan ratusan laki-laki dan perempuan di seluruh distrik. Antara Agustus 1983 dan Maret 1984, sekitar 100 warga sipil, kebanyakan di antaranya laki-laki, dibunuh di berbagai lokasi di seluruh distrik.
- “Pemberontakan” di Viqueque dan Lautém menandai berakhirnya gencatan senjata yang telah disepakati antara pasukan Indonesia dan pasukan Resistansi pada Maret 1983 dan dimulainya sebuah operasi, Operasi Persatuan, di mana panglima angkatan bersenjata Indonesia yang baru diangkat, Jenderal Benny Moerdani, dikatakan bermaksud membasmi habis gerakan Resistansi. Salah satu target utama operasi ini adalah warga sipil yang terlibat dalam kegiatan klandestin. Komisi menerima kesaksian tentang pembunuhan dan penghilangan terhadap lebih daripada 250 warga sipil di Distrik Lautém, Viqueque, Baucau, Dili, Aileu, Manufahi, Ainaro, Bobonaro, dan Covalima antara Agustus 1983 dan pertengahan 1984 (tidak termasuk mereka yang terbunuh di Viqueque pada saat yang berdekatan dengan penyerangan di Kraras), juga penahanan dan penyiksaan dan penganiayaan terhadap banyak orang lainnya, termasuk penahanan berkepanjangan tanpa diadili di Ataúro dan di sejumlah tempat lain, atau penahanan dan penganiayaan setelah pengadilan yang jelas-jelas tidak adil. Sifat sistematis dari pembunuhan ini nyata bagi Komisi dari ucapan panglima angkatan bersenjata Indonesia, dari skala pembunuhan ini, juga dari bukti dokumenter yang diterima oleh Komisi bahwa para kepala desa dan para anggota pasukan pertahanan sipil diperintahkan membuat daftar orang yang pernah aktif dalam gerakan Resistansi, yang menjadi dasar dari pelanggaran yang menyusul kemudian. Selain itu, sebagaimana halnya dengan pembunuhan dan penghilangan pada 1978-79, operasi-operasi pada 1983-84 melibatkan penggalangan sejumlah

besar institusi dalam tubuh aparat keamanan dan pemerintah sipil, termasuk Kopassus, semua tingkatan struktur teritorial, batalion-batalion tempur, pasukan pertahanan sipil, tim-tim paramiliter, polisi sipil dan militer, dan pegawai-pegawai pemerintah setempat.

1985-1998

33. Dalam periode 1985-1998 jumlah pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh ABRI dan pasukan pembantu mereka berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun awal pendudukan. Namun, pasukan keamanan Indonesia terus menerus membunuh dan menghilangkan warga sipil yang memang atau dicurigai mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok yang menentang pendudukan, termasuk para anggota Fretilin/Falintil, jaringan klandestin, dan kelompok-kelompok prokemerdekaan lainnya.

919. Meskipun jumlah pelanggaran fatal berkurang, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak dapat dipandang sebagai aksi tersendiri dari "oknum". Impunitas menciptakan iklim di mana praktik kelembagaan berikut ini ditoleransi dan dimaafkan:

- Pembunuhan terhadap warga sipil yang direkrut secara paksa untuk mengambil bagian dalam operasi atau latihan militer selama aksi militer
- Pembunuhan warga sipil sebagai pengganti petempur yang melarikan diri
- Penembakan terhadap sekelompok orang atau perorangan yang tidak menaruh curiga, yang sedang melaksanakan kegiatan sehari-hari, tanpa alasan yang jelas
- Penembakan terhadap kerumunan demonstran tak bersenjata

920. Praktik-praktik ini digambarkan dalam kasus-kasus berikut ini:

- Pada 12 November 1991, pasukan keamanan Indonesia menembak sekelompok pengunjung rasa yang membawa spanduk-spanduk prokemerdekaan dan bendera di Perkuburan Santa Cruz di Dili. Para pengunjung berjalan ke perkuburan itu untuk memperingati kematian Sebastião Gomes Rangel, aktivis klandestin yang terbunuh dalam penggerebekan di Gereja Motael pada 28 Oktober 1991. Sekurangnya 75 warga sipil, dan hampir pasti banyak lagi, terbunuh di perkuburan itu dan setelahnya.
- Pada 12 Januari 1995, di Gariana (Maubara, Liquiça), sebagai tanggapan terhadap upaya yang gagal untuk menangkap seorang yang dicurigai sebagai petempur Falintil, pasukan keamanan Indonesia menyeret enam warga sipil ke sebuah selokan dan membunuh mereka.
- Sebagai balasan atas pembunuhan terhadap informan yang dicurigai dan serangan terhadap sasaran militer oleh Falintil di Alas (Manufahi), pada Oktober dan November 1998, pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantu mereka menahan ratusan warga sipil, dan 20 orang dibunuh atau dihilangkan dalam minggu-minggu berikutnya.

34. Menanggapi tekanan internasional dan dalam negeri, militer Indonesia melakukan penyelidikan internal dan mengadakan pengadilan terhadap anggota militer yang relatif junior dalam setidaknya-tidaknya dua kasus, menyusul Pembantaian Santa Cruz di Dili pada 1991 dan pembunuhan enam warga sipil di Gariana (Maubara, Liquiça) pada 1995. Dalam kedua kasus ini proses peradilan mahkamah militer berakhir pada dikenakannya hukuman ringan para prajurit berpangkat rendah, yaitu antara delapan bulan sampai empat tahun. Proses peradilan ini tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya untuk menetapkan kebenaran dari apa yang terjadi selama peristiwa-peristiwa ini atau menentukan tanggung jawab komando dari kekejian-kekejian ini.
35. Praktik-praktik kelembagaan dari pasukan keamanan Indonesia yang mulai bergeser pada 1990-an, berakibat pada penurunan lebih lanjut dalam jumlah pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, terutama setelah Pembantaian Santa Cruz pada November 1991. Pergeseran ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk semakin berani dan berpengalamannya gerakan klandestin yang memanfaatkan media internasional dan mekanisme hak asasi manusia dan diplomasi, meningkatnya pengawasan internasional setelah Pembantaian Santa Cruz, berdirinya Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia, kemunculan masyarakat sipil yang memfokuskan diri pada hak asasi manusia Indonesia dan Timor-Leste, dan akhirnya Reformasi di Indonesia. Pada akhir 1990-an, sebagai tanggapan terhadap semakin bertumbuhnya gerakan prokemerdekaan yang terang-terangan, jumlah pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa kembali meningkat. Namun sebagian besar tindakan-tindakan ini tidak lagi secara langsung dilakukan oleh para anggota pasukan keamanan Indonesia, melainkan oleh para pasukan pembantu mereka.

1999

36. Pada 1999 pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantu mereka melancarkan rangkaian kekerasan terkoordinasi dan berkelanjutan, yang dirancang untuk mengintimidasi gerakan prokemerdekaan dan kemudian untuk memastikan hasil Jajak Pendapat yang diselenggarakan oleh PBB memihak Indonesia. Ribuan warga sipil ditahan, ratusan ribu dipaksa mengungsi, dan antara 1.400 sampai 1.500 dibunuh atau dihilangkan selama tahun itu. Sebagian besar pelanggaran fatal terjadi pada April, sebelum penandatanganan Kesepakatan 5 Mei, dan pada September-Oktober, setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat itu.
921. Pembebasan dari hukuman menciptakan keadaan di mana pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa terhadap warga sipil ditoleransi, didukung, dan dimaafkan. Sebagaimana di tahun-tahun awal ketika ABRI/TNI melancarkan operasi-operasi terhadap penduduk sipil, ABRI/TNI memobilisasi semua cabang aparat keamanan, termasuk pasukan pembantu dan banyak pegawai sipil dalam mengejar tujuan-tujuannya. Selama periode ini ABRI/TNI, polisi, dan kelompok-kelompok

milisi bertindak secara terkoordinasi. Basis-basis militer secara terbuka digunakan sebagai markas-markas milisi, dan peralatan-peralatan militer termasuk senjataapi dibagi-bagikan kepada kelompok-kelompok milisi. Beberapa personel ABRI/TNI juga merupakan komandan atau anggota milisi. Perwira-perwira intelijen ABRI/TNI menyediakan daftar nama orang yang dijadikan sasaran dan serangan terkoordinasi. Penguasa sipil secara terbuka menyediakan dana negara untuk kelompok-kelompok milisi serta berpartisipasi dalam pawai-pawai milisi dan kegiatan lainnya.

922. Sejauh mana persekongkolan ini terbentuk tergambar dalam kasus-kasus berikut ini:

- Pada 6 April 1999, sekitar 2.000 warga sipil yang mencari perlindungan di Gereja Liquiça diserang oleh milisi Besi Merah Putih, bersama-sama dengan prajurit dari Kodim Liquiça dan Brimob. Sekurang-kurangnya 30-60 warga sipil dibunuh, mayat-mayat mereka diangkut truk-truk militer, dan dibuang di tempat-tempat rahasia.
- Pada 12 April 1999, sebagai pembalasan terhadap pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Falintil terhadap prajurit ABRI/TNI dan seorang pemimpin pro-otonomi, ratusan warga sipil di Subdistrik Cailaco (Bobonaro) dikumpulkan dan dipaksa menghadiri pemakaman pemimpin pro-otonomi tersebut. Setidak-tidaknya tujuh orang yang dicurigai sebagai pendukung prokemerdekaan dibunuh oleh para prajurit TNI dan milisi Halilintar di Koramil yang berjarak 100 meter dari lokasi para pelayat. 13 orang lainnya dibunuh pada minggu-minggu berikutnya.
- Pada 17 April 1999, di akhir sebuah rapat umum pro-otonomi di depan Kantor Gubernur di Dili yang dihadiri oleh Gubernur Timor Timur; Bupati Dili; Walikota Dili; Komandan Korem, Kolonel Tono Suratman; Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri; Pangdam Udayana, Adam Damiri; dan dua orang pejabat senior militer lainnya, milisi Aitarak mengamuk hebat, yang berakhir dengan serangan terhadap rumah Manuel Carrascalão tempat ratusan orang telah mengungsi.
- Pada 6 September 1999, milisi Laksaur bersama para anggota pasukan keamanan Indonesia menyerang ribuan pengungsi yang mencari perlindungan di Gereja Suai (Covalima). Sekurang-kurangnya 27 orang dibunuh, termasuk tiga pastor, dan kemungkinan lebih dari itu. Mayat-mayat korban dibakar dan beberapa di antaranya dibawa melewati perbatasan untuk dikuburkan di sebuah lokasi rahasia di Timor Barat (Indonesia).
- Pada 5-6 September 1999, milisi Aitarak, bersama para anggota pasukan keamanan Indonesia, menyerang ratusan pengungsi yang mencari perlindungan tempat-tempat milik gereja, seperti kompleks kantor dioses, rumah Uskup Dili, biara-biara, dan kantor ICRC. Setidak-tidaknya 19 warga sipil dibunuh atau dibunuh. Sehari sebelumnya, yaitu pada 4 September, milisi menyerang kubu prokemerdekaan di Becora di Dili, membunuh sekurang-kurangnya tujuh orang.

- Pada 8 September 1999, milisi Dadurus Merah Putih dan milisi lainnya, di bawah komando pasukan keamanan Indonesia, menyerang ribuan pengungsi yang telah mencari perlindungan di kantor Polisi Resort Maliana, mengejar dan membunuh mereka yang melarikan diri hari berikutnya. Sebelum serangan itu, para pemimpin CNRT mendesak para anggota kepolisian Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada mereka, tetapi permohonan mereka diabaikan. Setidak-tidaknya 26 warga sipil dibunuh atau dihilangkan, sebagian besar adalah pemimpin CNRT setempat dan yang dicurigai sebagai pendukung prokemerdekaan, termasuk seorang anak berusia 12 tahun. Mayat-mayat mereka dibuang di sebuah lokasi rahasia.
 - Pada 12 September 1999, milisi Laksaur dan pasukan keamanan Indonesia, dalam usaha untuk secara paksa memindahkan para warga Desa Laktos, Fohorem (Covalima), membunuh 14 orang yang menolak dipindahkan ke Timor Barat.
 - Pada 21 September 1999, prajurit-prajurit ABRI/TNI dari Batalion 745 secara sembarang menembak para warga sipil selama gerakan mundur mereka dari Lospalos (Lautém) ke Dili, dan kemudian ke Kupang (Timor Barat, Indonesia). Setidak-tidaknya delapan orang, termasuk seorang wartawan asing, dibunuh dan dihilangkan selama perjalanan batalion ini dari Lospalos ke Dili.
 - Pada 20 Oktober 1999 milisi Sakunar dan Aitarak dan pasukan keamanan Indonesia, ketika mengepung para warga Desa Maquelab (Pante Makassar, Oecussi) untuk memindahkan mereka ke Timor Barat, membunuh enam orang di pasar Maquelab. Enam orang lainnya dibunuh kemudian dalam serangan terhadap desa itu.
37. Pada 1999 para korban pembunuhan di luar hukum dan pemindahan paksa ini terutama adalah laki-laki berusia dinas militer yang memang berhubungan atau disangka berhubungan dengan kelompok prokemerdekaan, termasuk CNRT, gerakan klandestin dan organisasi pelajar/mahasiswa dan pemuda. Namun, karena tujuan-tujuan militer dan para sekutunya adalah untuk mengintimidasi masyarakat umum untuk memilih “integrasi” dengan Indonesia, sasaran-sasaran mereka luas dan cara-cara mereka sembarang. Jadi, perempuan dan anak-anak yang mencari perlindungan bersama keluarga mereka juga dibunuh selama pembantaian itu. Kelompok-kelompok lain yang dirasa mendukung kelompok-kelompok prokemerdekaan, seperti para klerus, pelajar/mahasiswa, dan staf lokal UNAMET juga menjadi sasaran, terutama setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat.
38. Selama masa pendudukan (1975-1999), cara-cara dan situasi pembunuhan di luar hukum ini dilakukan antara lain berupa:
- Penembakan tanpa pandangbulu terhadap kelompok warga sipil tak bersenjata

- Memisahkan kelompok warga sipil tak bersenjata berdasarkan gender, kemudian menembak para laki-laki secara sembarangan
- Memerintahkan para korban untuk menggali lubang kuburan mereka sendiri sebelum kemudian membunuh mereka
- Memerintahkan para korban berbaris dalam formasi sebelum pembunuhan dilakukan baris per baris
- Pembunuhan terhadap perseorangan tak bersenjata dengan penembakan jarak dekat
- Membuang mayat-mayat dengan menguburkan, secara rahasia kilat tanpa satu usahapun untuk mengidentifikasi korban dan sanak keluarganya, dengan membuang ke dalam sumur, danau, atau laut
- Melemparkan granat kepada kelompok warga sipil tak bersenjata
- Kematian dalam penahanan karena pemukulan dan penyiksaan
- Pembunuhan seketika, setelah penangkapan selama operasi-operasi militer
- Pemenggalan di depan publik
- Pertunjukan di depan umum atau aksi-aksi nyata kanibalisme
- Pemotongan bagian tubuh tertentu di depan publik
- Memamerkan kepala, tungkai, atau potongan bagian tubuh lain di depan umum
- Memaksa warga sipil membunuh warga sipil lainnya di bawah ancaman
- Diikat kepada kendaraan yang sedang bergerak untuk menyeret korban sampai mati
- Pengorbanan/persembahan korban
- Diikat pada salib sebelum dibunuh
- Dilempar ke jurang, kadang setelah dilukai
- Menguburkan korban yang terluka hidup-hidup
- Pembunuhan di depan umum di mana pasangan suami istri ditelanjangi, dipukuli di tengkuk sampai jatuh ke dalam kuburan
- Pemukulan fatal di depan umum
- Memaradekan mayat
- Serangan mematikan dengan menggunakan senjata tradisional, seperti parang, tombak, dan pisau
- Kematian karena tindakan penyiksaan
- Penculikan diikuti oleh penghilangan, dalam sejumlah kasus mata korban ditutup dan diikat
- Pembunuhan bersasaran oleh milisi berdasarkan daftar yang dibuat oleh anggota militer

- Pembunuhan terhadap para tahanan dalam pusat penahanan, dan di tempat terpencil di pedalaman, termasuk di danau dan dari jembatan kampung
- Mempertunjukkan daun telinga dan alat kelamin orang yang hilang kepada para anggota keluarganya
- Pemerkosaan sebelum pembunuhan terhadap korban perempuan.

39. Di antara serangkaian kekejaman ini, ada sejumlah kecil orang berani yang menolak perintah untuk membunuh warga sipil tak bersenjata dan mencoba mencegah kejahatan-kejahatan ini.

- Seorang anggota Batalion 745 dari Bobonaro menolak membunuh sekelompok warga sipil, termasuk di dalamnya perempuan dan anak-anak, sehingga mencegah pembantaian terjadi di Rotuto (Manufahi), pada 1982.
- Seorang Indonesia anggota Brimob menyelundupkan seorang perempuan pemimpin CNRT demi keselamatannya, setelah Jajak Pendapat di Gleno, Ermera, pada 1999. Meskipun ia pada awalnya selamat, tetapi kemudian ia diperkosa dan dibunuh oleh milisi saat ia mencoba kembali ke rumah seminggu kemudian.
- Seorang Timor-Leste anggota polisi ditembak dan dibunuh oleh milisi dan ABRI/TNI ketika ia mencoba mencegah para anggota milisi menjarah dan membakar desa di Maubisse (Ainaro).

923. Selama pendudukan, komandan-komandan militer Indonesia memerintahkan, mendukung, dan memaafkan pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa yang sistematis dan meluas terhadap ribuan warga sipil di Timor-Leste. Angka kematian tinggi, bukti bahwa banyak di antara kematian ini terjadi selama operasi terkoordinasi yang dilakukan di seluruh wilayah Timor-Leste, dan upaya organisasi-organisasi nonpemerintah domestik dan internasional untuk menyampaikan kepada para penguasa sipil dan militer di Jakarta bahwa kekejian ini memang terjadi, telah mengesampingkan kemungkinan bahwa para pemimpin tertinggi dari militer, polisi, dan pemerintah sipil Indonesia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kegagalan sistematis militer Indonesia dan kepemimpinan sipil untuk mencegah dan menghentikan tindakan yang tentu mereka ketahui ini, dan untuk menghukum pelaku langsung dari kejahatan-kejahatan ini, dengan sendirinya merupakan bukti keterlibatan mereka.

40. Tanpa pengungkapan secara penuh, militer Indonesia terus melanggengkan dan mendukung aksi penghilangan paksa. Aksi yang merupakan penghilangan paksa harus dipandang sebagai pelanggaran berkelanjutan selama para pelaku terus menyembunyikan nasib dan keberadaan orang-orang yang telah dihilangkan.

Catatan Akhir

1. Xanana Gusmão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974 – 1976, Dili, 15 – 18 Desember 2001
2. Domingos Oliveira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
3. João Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
4. Mari Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
5. Mário Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
6. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
7. Domingos Oliveira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, 15-18 Desember 2003.
8. Mari Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
9. Mario Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
10. Mari Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal; 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
11. Rogério Lobato, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
12. CAVR, Profil Komunitas Mulo, Hatu Builico, Ainaro, 2 Februari 2004; CAVR, Profil Komunitas Kasabauk [ketika itu disebut Maudemo], Tilomar, Covalima, 27 November 2003 ; CAVR, Profil Komunitas Uaitame, Quelicai, Baucau, 12 Desember 2003; CAVR, Profil Komunitas Orlalan/Batara, Laclubar, Manatuto, 24 Januari 2003; CAVR, Profil Komunitas Bibileo, Viqueque, 5 Juni 2003; CAVR, Profil Komunitas Saburai, Maliana, Bobonaro, 13 Januari 2003.
13. Pernyataan-pernyataan HRVD 01003; 1670; 3576; 8427; 8130; 4990; dan 4993.
14. CAVR, Profil Komunitas Maulau, (Maubisse, Ainaro) 26 Mei 2003; lihat juga Pernyataan HRVD 4993; 4990 dan 8130.
15. Pernyataan HRVD 6443.
16. Pernyataan HRVD 2507.
17. CAVR, Profil Komunitas Vila Verde, Mascarenhas dan Rumbia, Dili, 10 Juni 2003.
18. CAVR, Profil Komunitas Asucaí Lorosae, Nain Feto, Dili, 27 November 2003.
19. CAVR, Profil Komunitas Bemori, Cristo Rei, Dili, 16 Desember 2003.
20. CAVR, Wawancara dengan Carlos Vicente de Sousa Guilherme, Martins dan Manuel Henrique Ena, Darulete, Liquiça, 8 Maret 2004; lihat juga CAVR, Profil Komunitas Darulete, Liquiça, 13 Februari 2003.
21. CAVR, Wawancara dengan Guilherme Martins, Darulete, Liquiça, 8 Maret 2004; lihat juga Pernyataan HRVD 3570.
22. CAVR, Wawancara dengan Adelina Freitas, Vicente de Sousa, Guilherme Martins, dan Henrique Ena, Darulete, Liquiça, 8 Maret 2004.
23. Pernyataan HRVD 3003.
24. Pernyataan HRVD 5428.
25. Pernyataan HRVD 3570
26. Pernyataan HRVD 2054.
27. CAVR, Wawancara dengan Brigida Martins, Liquiça, 10 Maret 2004. Dibenarkan juga dalam Pernyataan HRVD 3003.
28. CAVR, Profil Komunitas Desa Manelobas, Maubisse, Ainaro, 23 Mei 2003.
29. CAVR, Profil Komunitas Desa Manetu, Maubisse, Ainaro, 8 Juli 2003.
30. CAVR, Profil Komunitas Desa Edi, Maubisse, Ainaro, 9 Juni 2003.
31. CAVR, Profil Komunitas Maulau, Maubisse, Ainaro, 26 Mei 2003; lihat juga pernyataan HRVD 4993.

32. CAVR, Profil Komunitas Asumano, Liquiça, Liquiça, 6 Februari 2003.
33. CAVR, Wawancara dengan Manuel Luis, Lisbon, Portugal, 10 Maret 2004; lihat juga Pernyataan HRVD 0280.
34. CAVR, Profil Komunitas Asumano, Liquiça, Liquiça, 6 Februari 2003.
35. Pernyataan HRVD 4882.
36. Pernyataan HRVD 5467.
37. Pernyataan HRVD 1071
38. Pernyataan HRVD 6199.
39. CAVR, Wawancara dengan Francisco Barbosa, Turiscai, Manufahi, 8 September 2003
40. CAVR, Wawancara dengan Francisco Xavier do Amaral, 18 Juni 2004.
41. Mateus Soares, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian Massal, Dili, 19-21 November 2003.
42. CAVR, Profil Komunitas Orlalan/Batara, Laclubar, Manatuto, 24 Agustus 2003; lihat juga CAVR, Wawancara dengan Francisco Barbosa, Turiscai, Manufahi, 8 September 2003.
43. Pernyataan HRVD 1413.
44. Pernyataan HRVD 1468.
45. CAVR, Profil Komunitas Asumano, Liquiça, 6 Februari 2003.
46. CAVR, Wawancara dengan Manuel Henrique Ena, Carlos Vicente, Darulete, Liquiça, 8 Maret 2004.
47. CAVR, Wawancara dengan Carlos Vicente, Darulete, Liquiça, 8 Maret 2004
48. CAVR, Profil Komunitas Darulete, Liquiça, 13 Februari 2003
49. Pernyataan HRVD 1088.
50. CAVR, Wawancara dengan Mario Nicolau dos Reis, Dili, 17 Januari 2002 dan 27 Juli 2003; CAVR, Wawancara dengan Maria José Fatima Ximenes, Dili, [wawancara tak bertanggal]; CAVR, Wawancara dengan Manuel Agustino Freitas, Bobonaro, 12 Juni 2003; lihat juga pernyataan HRVD 3742; 5698; dan 3715.
51. CAVR, Wawancara dengan Mario Nicolau dos Reis, Dili, 17 Januari 2002 dan 27 Juli 2003; diperkuat oleh Pernyataan HRVD 5698.
52. CAVR, Wawancara dengan Mario Nicolau dos Reis, Dili, 17 November 2002 dan 27 Juli 2004.
53. Lihat secara umum Mario Lemos Pires, *Descolonização de Timor*, bab tentang Kudeta UDT.
54. CAVR, Wawancara dengan João da Costa, mantan tahanan UDT, Same, 24 Juni 2003; lihat juga pernyataan HRVD 6465 01; CAVR, Wawancara dengan Francisco Gonçalves, mantan tahanan Fretilin, Dili, 14 Juni 2003.
55. CAVR, Profil Komunitas Lacló, Atsabe, Ermera, 16 Juni 2003.
56. Pernyataan HRVD 2223.
57. Pernyataan HRVD 8345; lihat juga Pernyataan HRVD 8384.
58. CAVR, Wawancara dengan Elidio Maria de Jesus, Dili, 24 Juni 2003.
59. Monis da Maia, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, Dili, 16 Desember 2003.
60. Monis da Maia, *Ibid.*
61. Monis da Maia, *ibid.*
62. CAVR, Wawancara dengan Rosa Pina Meneses, [istri korban] 22 Agustus 2003; lihat juga wawancara dengan Laura Pina Meneses Belo, 22 Agustus 2003.
63. CAVR, Wawancara dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
64. CAVR, Wawancara dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004.
65. Pernyataan HRVD 9182.
66. Manuel Duarte, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal, Dili, 15-18 Desember 2003; lihat juga Pernyataan HRVD 6203.
67. Manuel Duarte, *ibid.*
68. CAVR, Wawancara dengan Florentino de Jesus Martins, Talimoro, Ermera, 25 Agustus 2003.
69. CAVR, Wawancara dengan Lorenzo dos Santos, Poetete, Ermera, 25 Agustus 2003; lihat juga CAVR, Wawancara dengan Manuel Duarte, Urahou, Hatolia, Ermera, 23 September 2003; lihat juga CAVR, Wawancara dengan Florentino de Jesus Martins, Poetete, Ermera, 25 Agustus 2003.
70. CAVR, Wawancara dengan Eufrazia de Jesus Soares, Gleno, Ermera, 25 September 2003.

71. Pernyataan HRVD 9016.
72. Pernyataan HRVD 7946.
73. CAVR, Wawancara dengan Adelino Maia, [wawancara tak bertanggal]; lihat juga Pernyataan HRVD 1688; lihat juga CAVR, Wawancara dengan Carolino Madeira, Lauana, Letefoho, 24 September 2003.
74. Pernyataan HRVD 1082.
75. Pernyataan HRVD 1082.
76. Pernyataan HRVD 2610.
77. Pernyataan HRVD 6990.
78. Submisi kepada CAVR, *Operasi Militer ABRI Wilayah Timor Timur, 1974-1999*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta, Maret 2004.
79. Pernyataan HRVD 1107 : 1164 : 1123 : 0179 : 2004 : 2574 : 2589 : 2468 : 4221 : 4280 :4285 dan 4348.
80. CAVR, Wawancara Claudio Vieira, Bairro Pite, Dili, 10 Juni 2004.
81. Pernyataan HRVD 1136.
82. Pernyataan HRVD 4607.
83. Ibid.
84. CAVR, Wawancara dengan Florentino de Jesus Martins, Talimoro, Ermera, 25 Agustus 2003.
85. CAVR, Wawancara dengan Tomás Gonçalves, 8 Juni 2004 dan 13 September 2004.
86. *Sydney Morning Herald*, 29 Mei 1999; AAP, 20 Oktober 1999.
87. Ball dan McDonald, *Deaths in Balibó, Lies in Canberra*, Allen & Unwin, 2000, halaman 101.
88. Kesaksiannya diterbitkan di *The Canberra Times* pada 29 Oktober 1975.
89. Tom Sherman, 1996 Report, hal. 89.
90. CAVR, Wawancara rekaman video dengan Guido dos Santos, Balibo, Bobonaro, 21 Juli 2004
91. Lihat affidavit peneliti CAVR dalam percakapan dengan Guido dos Santos.
92. CAVR, Wawancara dengan Olandino Luis Maria Guterres, Dili, 7 Juni 2004.
93. Lihat Laporan Tom Sherman, 1996, halaman 62-63.
94. Dalam masalah ini, lihat Laporan Tom Sherman, 1996, hal.110; Ball dan McDonald, hal. 115; dan "The Balibo Killings 1975 and intelligence handling - a report of an inquiry by the Inspector-General of Intelligence and Security" ("The Blick Report"), Juni 2002.
95. Lihat, misalnya, Ken Conboy, *Kopassus*, Equinox Publishing. Jakarta. 2003.
96. CAVR, Wawancara saksi tanpa nama [W2], 24 Agustus 2004, Dili. Lihat juga James Dunn, *Timor: a People Betrayed*, Jacaranda Press, The Jacaranda Press Milton, Queensland, 1983, hal. 284; Lihat juga Amnesty International, *East Timor Violations*, hal. 26.
97. CAVR, Wawancara dengan Lay Kuon Nhen, Dili, 23 Februari 2004; CAVR, Wawancara dengan W2, Dili, 24 Agustus 2004; Lihat juga submisi kepada CAVR , wawancara dengan Chong Kui Yan, Anthony Goldstone, Australia, 1984.
98. CAVR, Wawancara dengan Afonso Luis Silveira, Dili, 14 Desember 2003.
99. CAVR, Wawancara dengan Herminio da Silva da Costa, Jakarta, Indonesia, 9 Agustus 2004.
100. CAVR, Wawancara dengan informan tanpa nama [W2], 24 Agustus 2004, Dili. Dokumen yang diketik, berjudul "East Timorese killed as a direct result of the Indonesian Invasion of East Timor in 1975 and the subsequent occupation of East Timor by Indonesian Military Forces," Anthony Goldstone.
101. CAVR, Wawancara dengan informan tanpa nama [W2], 24 Agustus 2004, Dili, dan dokumen berjudul "East Timorese killed as a direct result of the Indonesian Invasion of East Timor in 1975 and the subsequent occupation of East Timor by Indonesian Military Forces," Anthony Goldstone.
102. Kesaksian Chong Kui Yan, yang dikutip dalam Amnesty International, *East Timor Violations*, hal. 26.
103. CAVR, Wawancara dengan Alberto de Oliveira Camara, Dili, 17 Agustus 2004. Pernyataan ini didukung oleh wawancara CAVR dengan Francisco da Cunha, Dili, 3 Februari 2004.
104. CAVR, Wawancara dengan Francisco da Cunha, Dili, 3 Februari 2004; CAVR, Wawancara dengan A3 (informan tanpa nama), Dili, 16 Agustus 2004.
105. CAVR, Wawancara dengan Felismina dos Santos da Conceição, Dili, 19November 2003.
106. CAVR, Wawancara dengan Francisco Soriano, Dili, 4 Juli 2004.
107. CAVR, Wawancara dengan Francisco da Cunha, Dili, 3 Februari 2004; lihat pernyataan HRVD 2566.
108. Pernyataan HRVD 2566.

109. CAVR, Wawancara dengan Felismina dos Santos da Conceição, Dili, 19 November 2003.
110. CAVR, Wawancara dengan Domingos Freitas, 29 Juni 2004.
111. CAVR, Wawancara dengan Filomeno Gomes, 25 Juni 2004.
112. CAVR, Wawancara dengan Alexandrino do Rego, 22 Agustus 2004.
113. CAVR, Wawancara dengan Sebastiana Henrique Guterres Soares Belo, Dili, 14 Agustus 2004.
114. CAVR, Wawancara dengan Alberto de Oliveira Camara, Dili, 15 Agustus 2004.
115. Pernyataan HRVD 3708.
116. CAVR, Wawancara dengan Maria Filomena Godinho Isaac, Dili, 13 Agustus 2004.
117. Pernyataan HRVD 3708.
118. CAVR, Wawancara dengan Acacio da Costa Carvalho, 16 Agustus 2004, Dili, dan lihat juga Pernyataan HRVD 5072
119. Pernyataan HRVD 5073.
120. CAVR, Wawancara dengan saksi tanpa nama [A3], Dili, 16 Agustus 2004. Lihat juga Pernyataan HRVD 5072: 5069 dan 5070.
121. CAVR, Wawancara dengan Felismina dos Santos da Conceição, Dili 19 November 2004.
122. CAVR, Wawancara dengan Iria de Araújo, Dili, 4 Agustus 2004.
123. CAVR, Wawancara dengan Daniel João Batista, Kupang, Timor Barat, Indonesia, 21 Juli 2004.
124. CAVR, Wawancara dengan saksi tanpa nama [A3], Dili, 13 Agustus 2004.
125. Kesaksian Chong Kui Yan, dalam Amnesty International, *East Timor Violations*, hal. 26.
126. Wawancara dengan Laurinda Guterres Ximenes di *Vox Populi*, No. 14, Minggu IV, Juni, 2004, hal. 14.
127. CAVR, Wawancara dengan saksi tanpa nama [W2], Dili, 24 Agustus 2004. Lihat juga CAVR, Wawancara dengan A3, Dili, 13 Agustus 2004.; CAVR, Wawancara dengan Herminio da Silva da Costa, Jakarta, Indonesia, 9 Agustus 2004.; CAVR, Wawancara dengan Daniel João Batista, Kupang, Timor Barat, Indonesia, 21 Juli 2004 dan "Isabel dos Santos Barreto Lobato: Putri Bangsa yang Dilupakan," *Vox Populi*, No. 14, Minggu IV, Juni, 2004, hal. 14.
128. CAVR, Wawancara dengan saksi tanpa nama [W2], Dili, 24 Agustus 2004.
129. CAVR, Wawancara dengan Herminio da Silva da Costa, Jakarta, Indonesia, 9 Agustus 2004.
130. CAVR, Wawancara dengan saksi tanpa nama [A3], Dili, 13 Agustus 2004. Ini didukung oleh kesaksian Chong Kui Yan; lihat Amnesty International, *East Timor Violations*, hal. 26.
131. CAVR, Wawancara dengan Daniel João Batista, Kupang, Timor Barat, Indonesia, 21 Juli 2004 dan CAVR, Wawancara dengan Herminio da Silva da Costa, Jakarta, Indonesia 9 Agustus 2004.
132. Lihat Julius Poer, Benny Moerdani, *Potret Seorang Prajurit Negarawan*, Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman, Jakarta, 1993, hal. 400; lihat juga Saleh Kamah, *Seroja*, hal. 154; dan Hendro Subroto, *Saksimata Integrasi Timor Timur*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 182; Lihat juga CAVR, Wawancara dengan Herminio da Silva da Costa, Jakarta, Indonesia, 9 Agustus 2004.
133. CAVR, Wawancara dengan Herminio da Costa da Silva, Jakarta, Indonesia, 9 Agustus 2004.
134. CAVR, Wawancara dengan saksi tanpa nama [A3], 16 Agustus 2004, Dili.
135. CAVR, Wawancara dengan Alexandrino do Rego, Dili, 4 Februari 2004.
136. Ibid.
137. CAVR, Wawancara dengan Alberto de Oliveira Camara, Dili, 17 Agustus 2004.
138. CAVR, Wawancara dengan Alexandrino do Rego, Dili, 4 Februari 2004.
139. CAVR, Wawancara dengan saksi tanpa nama [W2], Dili, 24 Agustus 2004.
140. CAVR, Wawancara dengan saksi tanpa nama, Melbourne, Australia, tanpa tanggal.
141. CAVR, Wawancara dengan Iria de Araújo, Dili, 4 Agustus 2004.
142. Ibid
143. Ibid
144. CAVR, Wawancara dengan Francisco Soriano, Dili, 4 Juli 2004.
145. CAVR, Wawancara dengan Iria de Araújo, Dili, 4 Agustus 2004.
146. CAVR, Wawancara dengan saksi tanpa nama [W2], Dili, 24 Agustus 2004; lihat juga Pernyataan HRVD 05064.
147. Pernyataan HRVD 9068.

148. Alexandre da Costa Araújo, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, Dili, 19-21 November 2003.
149. CAVR, Wawancara dengan Humberto Martins da Cruz, Dili [tanpa tanggal]
150. Alexander da Costa Araújo, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembunuhan Massal, Dili, 19-21 November 2003.
151. CAVR, Wawancara dengan João da Costa, Letefoho, Same, 24 Juni 2003; Francisco Gonçalves, Dili, 14 Juni 2003; dan Aleixo Ximenes, Dili, 2 Februari 2004; lihat juga Pernyataan HRVD 9016; 9068 dan 4742.
152. CAVR, Wawancara dengan João da Costa, Letefoho, Same, 24 Juni 2003; dan Assis dos Santos, Maliana, tanpa tanggal.
153. CAVR, Wawancara dengan Monis da Maia, Dili, 5 Desember 2004; lihat juga Monis da Maia, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
154. *ibid*
155. CAVR, Wawancara dengan Assis dos Santos, Dili, [tanpa tanggal],
156. Pernyataan HRVR 9026.
157. CAVR, Wawancara dengan João da Costa, Letefoho, Same, 24 Juni 2004. Dalam peranan kunci César Maulaka; lihat juga CAVR, Wawancara dengan Luis Filipe Aquino Caldas, Dili [tanpa tanggal], dan CAVR, Wawancara dengan Francisco Gonçalves, Dili, 14 Juni 2003.
158. Pernyataan HRVD 9016 dan 9026.
159. CAVR, Wawancara dengan Manuel Gaspar (Torado), Uaitame, Uatolari, Viqueque, 19 September 2003; Agostinho Boavida Ximenes (Sera Malik), Soe, Timor Barat, Indonesia, 28 Agustus 2004.
160. CAVR, Wawancara dengan Agostinho Boavida Ximenes (Sera Malik), Soe, Timor Barat, 28 Agustus 2004. Lihat juga Xanana Gusmão, Sarah Niner (ed), *To Resists is to Win; Autobiography of Xanana Gusmão*, hal 39.
161. CAVR, Wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 11 Mei 2004.
162. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
163. CAVR, Wawancara dengan Francisco Gonçalves, Dili, 14 Juni 2003.
164. CAVR, Wawancara dengan Humberto Martins Da Cruz, Dili, tanpa tanggal.
165. CAVR, Wawancara dengan Francisco Gonçalves, Dili, 14 Juni 2003
166. CAVR, Wawancara dengan Lucas da Costa, Dili, 12 Juni 2004
167. CAVR, Wawancara dengan José Catarino Gregório Magno Trindade de Melo (Labut Melo), Kupang, 23 Juli 2004; dan CAVR, Wawancara dengan Herminio da Silva da Costa, Jakarta, Indonesia, 9 Agustus 2004.
168. CAVR, Wawancara dengan José Catarino Gregório Magno Trindade de Melo (Labut Melo), Kupang, 23 Juli 2004.
169. CAVR, Wawancara dengan Francisco Gonçalves, Dili, 14 Juni 2003.
170. CAVR, Wawancara dengan Francisco Gonçalves, Dili, 14 Juni 2003; Luis Antonio de Aquino Caldas, Dili, tanpa tanggal; dan Agostinho Boavida Ximenes (Sera Malik), Soe, Timor Barat, Indonesia, 24 Agustus 2004.
171. Xanana Gusmão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
172. Mari Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
173. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
174. Rogerio Lobato, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
175. Pernyataan HRVD 0166.
176. Pernyataan HRVD 5040.
177. Pernyataan HRVD 2208 dan 3564.
178. Pernyataan HRVD 3554.
179. Pernyataan HRVD 5027 dan 5018.

180. Pernyataan HRVD 4191
181. Pernyataan HRVD 4068.
182. Pernyataan HRVD 2079.
183. Pernyataan HRVD 0464.
184. Pernyataan HRVD 4517.
185. Lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 05058 dan 03254.
186. Pater José Tavares, *Tuba Rai Metin, Basis-Basis Perlawanan*, 27 Maret 2002.
187. Pernyataan HRVD 3829.
188. Pernyataan HRVD 0537.
189. Pernyataan HRVD 5363.
190. Pernyataan HRVD 3897.
191. Pernyataan HRVD 3067.
192. Pernyataan HRVD 5235.
193. Pernyataan HRVD 3551.
194. Pernyataan HRVD 1669.
195. Pernyataan HRVD 0447.
196. Pernyataan HRVD 0487.
197. Pernyataan HRVD 4495.
198. Pernyataan HRVD 1347 dan 3152.
199. Pernyataan HRVD 5052.
200. Pernyataan HRVD 8909.
201. Pernyataan HRVD 6409.
202. Pernyataan HRVD 1311, 3372, 1043, 1687, 1311, 3372 dan 3252; lihat juga Lucio Meneses Lopes, kesaksian pada CAVR, Audiensi Publik Nasional tentang Pembunuhan Massal, 19-23 November 2003.
203. Pernyataan HRVD 4531.
204. Pernyataan HRVD 5493.
205. Lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 2238, , 00503, 07411, 04984, dan 04995.
206. Pernyataan HRVD 3372.
207. Pernyataan HRVD 8536.
208. Pernyataan HRVD 3091.
209. Pernyataan HRVD 7210.
210. Pernyataan HRVD 4474.
211. Pernyataan HRVD 4200.
212. Pernyataan HRVD 5264, 5279.
213. Pernyataan HRVD 6547. Untuk pembunuhan-pembunuhan lainnya oleh Tonsus di daerah ini, lihat Pernyataan HRVD 5296, 8014, 6480, 1938 dan 06553.
214. Lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 08538, 08538, 00543, 06179, 06179, 07696, 07676, 07076, 03165, 03252, 05336, 05263, 08345, 06179, 07988, 00446, 02510, 07803, 03091, 08950 dan 04185-05.
215. Pernyataan HRVD 00543.
216. Pernyataan HRVD 07431.
217. Pernyataan HRVD 04216.
218. Lihat Pernyataan HRVD 02323, 05288, 05365, 03429, 05408, 00079, 03401, 03224, 04073, 02257, 02264, 05324, 06961, 05408, 04073, 03429 dan 04085; dan Profil Komunitas, Debu-Waen, Mahaquidan (Alas, Manufahi), Profil Komunitas, Hera, Dili dan Profil Komunitas, Liurai, Aileu Kota (Aileu).
219. Pernyataan HRVD 08911.
220. Untuk 1980, lihat Pernyataan HRVD 6961; CAVR, Profil Komunitas, Liurai, Kota Aileu, Sub-distrik Aileu, Distrik Aileu; dan CAVR, Profil Komunitas, Hera, Distrik Cristo Rei Dili; untuk 1983-84, lihat Pernyataan HRVD 4772 (Manufahi), 01447 (Aileu), 2323 (Baucau), 2359 (Baucau) dan 3834 (Baucau).
221. Pernyataan HRVD 04073, 04085 dan 03219; dan CAVR, wawancara dengan Florindo Sarmento, Aileu, [tak bertanggal].
222. Pernyataan HRVD 03224, 03218, 03219, 92979 dan 02082.

223. Pernyataan HRVD 02257, 02252, 02264 dan 02259; CAVR, Profil Komunitas, Iparira/Laiara, Desa Parlamento, Sub-distrik Moro, Distrik Lautém
224. Amnesty International, Laporan Tahunan 1985.
225. Lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 05395, 06802, 07781, 09188, 07076, 07930 dan 07117.
226. Pernyataan HRVD 01810.
227. Pernyataan HRVD 01659.
228. Pernyataan HRVD 08529.
229. Pernyataan HRVD 02224.
230. Pernyataan HRVD 03828.
231. Pernyataan HRVD 03019.
232. Pernyataan HRVD 08089.
233. Pernyataan HRVD 07699.
234. Pernyataan HRVD 07696.
235. Pernyataan HRVD 07497.
236. Lihat CAVR, Profil Komunitas Desa Liurai dan Desa Manumera, Sub-distrik Turiscaí, Distrik Manufahi.
237. CAVR, Ringkasan Kasus: Pembantaian di Foholau, Turiscaí, Manufahi; dan Pernyataan HRVD 06640 dan 07532.
238. Lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 01810, 03551, 01669, 01659, 08529, 05434, 02214, 07532 dan 07485.
239. Pernyataan HRVD 01379.
240. Pernyataan HRVD 02214.
241. Pernyataan HRVD 05985.
242. Lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 01484 dan 04765.
243. CAVR, wawancara dengan Luis Pereira, Laclubar, 12 April 2003.
244. Pernyataan HRVD 01757.
245. Pernyataan HRVD 02294.
246. Pernyataan HRVD 08897.
247. Pernyataan HRVD 04765.
248. Pernyataan HRVD 07906.
249. Pernyataan HRVD 04146.
250. CAVR, wawancara dengan José Francisco Pires I Silva, Dili, 12 Januari 2004.
251. Pernyataan HRVD 02127.
252. Pernyataan HRVD 04448.
253. Pernyataan HRVD 05324.
254. CAVR, wawancara dengan Pedro Pinto, Uatu-Carbau, Viqueque, 14 Desember 2003 dan Tomás da Cruz; dan Pernyataan HRVD 07367, yang juga menyebut Carlos, Manuel Kaimuadee, Delin, dan Francisco Borulau sebagai korban.
255. Tentang Pasmar 9, lihat Pernyataan HRVD 07699; tentang Pasmar 10, lihat Pernyataan HRVD 02385; tentang Batalion 315, lihat Pernyataan HRVD 02798 dan 06059; tentang Batalion 328, lihat Pernyataan HRVD 03898 dan 07329; tentang Batalion 721, lihat Pernyataan HRVD 00490, 00494, 00481 dan 03829; tentang Batalion 312, lihat Pernyataan HRVD 02294; tentang Batalion 202, lihat Pernyataan HRVD 04200, 07431, 04456, 00487, 06032, 07455
256. Pernyataan HRVD 03083. Penghilangan lain-lain dari markas Batalion 202 di Uaida dilaporkan dalam Pernyataan HRVD 03085, 03154, 03122 dan 03138.
257. Kesaksian Onu Bu, Komunike CRRN, 1983, hal. 34.
258. CAVR, wawancara dengan Carmen da Cruz, Dili, tanpa tanggal
259. CAVR, wawancara dengan Meria Montalvão, Dili, tanpa tanggal
260. Pater José Tavares, *Tuba Rai Metin, Sidang Basis de Apoio*, 27 Maret 2002.
261. CAVR, wawancara dengan Izidora da Costa Boavida, Joana M. Dulce Viktor, Dili, 25 Mei 2004; Aleixo Ximenes, Dili, 2 Februari 2004.
262. CAVR, Wawancara dengan Aleixo Ximenes, Dili, 2 Februari 2004.

263. Lihat HRVD, pernyataan 08041, 05671, 03759, 08037, 03742, 08115, 05775, 03529.
264. Wawancara dengan Justino Mota, Lisbon 4 Juli 1984 (Dokumen disubmisi kepada CAVR oleh Anthony Goldstone).
265. CAVR, wawancara dengan Maria de Fatima Vaz de Jesus, Beborá, Dili, 23 September 2004.
266. CAVR, wawancara dengan Merita Alves, eks-tawanan dan anggota Komite Fretilin. Dili, 19 September 2003.
267. HRVD, pernyataan 05671 dan 03759; dan wawancara dengan Justino Mota, Lisbon 4 Juli 1984 (Dokumen diserahkan pada CAVR oleh Anthony Goldstone).
268. CAVR, wawancara dengan Constantino dos Santos, Quelicai (Baucau), 28 November 2002 dan Zeferino Armando Ximenes, Baucau, 13 Juni 2003; Komunike CRRN, Kesaksian Onu Bu, Juli 1963; Gatimor No 6; dan wawancara dengan Justino Mota, Lisbon, 4 Juli 1984.
269. CAVR, wawancara dengan Maria de Fatima Vaz de Jesus, Beborá, Dili, 23 September 2004.
270. Ibid.
271. CAVR, wawancara dengan Constantino dos Santos, bekas anggota Hansip, Quelicai, 23 Maret 2004.
272. Amnesty International, *East Timor: Violations of Human Rights*, London, 1985.
273. CAVR, wawancara dengan João da Costa, Baucau, 10 Desember 2003 dan Merita Alves, Dili, 19 September 2003.
274. CAVR, wawancara dengan Rui Lopes, Camenassa, Covalima, 31 Oktober, 2003; dan dengan Merita Alves, Dili, 19 September 2003.
275. CAVR, wawancara dengan Virginia da Cruz Dias Quintas, Lisbon, 6 April 1985 (Dokumen diserahkan pada CAVR oleh Anthony Goldstone).
276. CAVR, Ringkasan Kasus: Penghilangan Maria Gorete Joaquim.
277. CAVR, wawancara dengan Merita Alves, Dili, 19 September 2003.
278. CAVR, wawancara dengan Constantino dos Santos, Letemumu, (Quelicai, Baucau), 28 November 2002; Cipriano Ximenes (Quelicai, Baucau), 28 November 2002; dan Leonel Guterres (Quelicai, Baucau), 28 November 2002.
279. Xanana Gusmão, *Timor-Leste – Um Povo, Uma Pátria*, hal. 42; Sarah Niner (ed), *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão*, hal. 59.
280. CAVR, wawancara dengan Fernando José Freitas Soares dan Venancio dos Santos Alves, Quelicai, 2 Mei 2004, dan Zeferino Armando Ximenes, Baucau, 13 Juni 2003; Gatimor No 6 (Dokumen diserahkan pada CAVR oleh Anthony Goldstone) dan Komunike CRRN, Juli 1983.
281. CAVR, wawancara dengan Constantino dos Santos, Letemumu (Quelicai, Baucau), 13 Juni 2003; dan José Correia (Calala), Tirilolo (Baucau, Baucau), 24 Maret 2004.
282. Pernyataan HRVD 00595 and 00597; dan Gatimor No 6.
283. Pernyataan HRVD 00187.
284. Pernyataan HRVD 00572 dan 07800.
285. Pernyataan HRVD 7092 dan 7800.
286. CAVR, wawancara dengan Zeferino Armando Ximenes, Baucau, 13 Juni 2003; dan Komunike CRRN, Kesaksian Onu Bu, Juli 1963.
287. CAVR, wawancara dengan Constantino dos Santos, Letemumu, Quelicai (Baucau), 28 November 2002
288. CAVR, wawancara dengan Zeferino Armando Ximenes, Baucau, 13 Juni 2003.
289. Ibid.
290. CAVR, wawancara dengan Constantino dos Santos, Letemumu (Quelicai, Baucau), 13 Juni 2003; dan José Correia (Calala), Tirilolo (Baucau, Baucau), 24 Maret 2004.
291. Lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 0597 [Celestino Peloy dan Agapito Gama]
292. Pernyataan HRVD 0528.
293. Pernyataan HRVD 6113.
294. Pernyataan HRVD 5324.
295. Pernyataan HRVD 7715 dan 2363.
296. Pernyataan HRVD 0538.
297. Pernyataan HRVD 0556.

298. Pernyataan HRVD 4448.
299. Pernyataan HRVD 2364.
300. CAVR, Profil Komunitas Desa Uaitame, Sub-distrik Quelicai, Distrik Baucau, 12 Desember 2003
301. Pernyataan HRVD 2361.
302. Pernyataan HRVD 6099.
303. Pernyataan HRVD 6104.
304. Pernyataan HRVD 7787.
305. CAVR, Wawancara dengan Maria Teresa Corvelo Avila Marçal Sarmento, Dili, 4 Oktober 2005
306. CAVR, wawancara dengan Maria Teresa Corvelo Avila Marçal Sarmento, Dili, 4 Oktober 2005.
307. CAVR, Profil Komunitas Desa Bauro, Sub-distrik Lospalos, Distrik Lautém, dan Komunike CRRN, 23 Juli 1983.
308. Pernyataan HRVD 05332, 05660 dan 04422; dan CAVR, Profil Komunitas, Desa Fuiloro, Sub-distrik Lospalos, Distrik Lautém.
309. Komunike CRRN, 23 Juli 1983.
310. Xanana Gusmão, *Timor-Leste – Um Povo, Uma Pátria*, hal. 45; Sarah Niner (ed), *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão*, hal. 62-63.
311. Pernyataan HRVD 0737, 0740, 0741, 0713, 0702, 0706, 7586 dan 0788; Xanana Gusmão, *Timor-Leste – Um Povo, Uma Pátria*, hal. 45 dan Sarah Niner (ed), *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão*, hal. 63; dan Komunike CRRN, 25 Juli 1983.
312. Pernyataan HRVD 02257, 02252, 02264 dan 02259; dan CAVR, Profil Komunitas, *Aldeia-aldeia* Iparira dan Laiara, Parlamento, Sub-distrik Moro, Distrik Lautém, 6 Maret 2003
313. Pernyataan HRVD 01623 dan CAVR, Profil Komunitas, Desa Loro, Sub-distrik Tutuala, Distrik Lautém, 22 November 2002
314. Pernyataan HRVD 01623; lihat juga CAVR, Profil Komunitas Loro, Sub-distrik Tutuala, Distrik Lautém, 22 November 2002
315. Pernyataan HRVD 01618, 00615, 01622, 01636, 00740, 01649 dan 02286.
316. Pernyataan HRVD 02254.
317. CAVR, Profil Komunitas, *Aldeia-aldeia* Pitileti, Etepi dan Ira-Onu, Kota Com, Sub-distrik Moro, Distrik Lautém, 6 Maret 2003
318. Pernyataan HRVD 01604 dan 01638.
319. Pernyataan HRVD 02300.
320. Pernyataan HRVD 02115 dan 03979.
321. Pernyataan HRVD 03968.
322. Pernyataan HRVD 01650.
323. Pernyataan HRVD 02130.
324. Pernyataan HRVD 07586.
325. HRVD Statements 05364, 05365, 05369 and 05376.
326. Pernyataan HRVD 05364, 05365, 05369 dan 05376.
327. Pernyataan HRVD 0703; CAVR, Profil Komunitas, Desa Raça, Sub-distrik Lospalos, Distrik Lautém, dan Laporan CRRN, 23 Juli 1983.
328. CAVR, Profil Komunitas, Desa Lore I, Sub-distrik Lospalos, Distrik Lautém; dan Pernyataan HRVD 5345.
329. CAVR, wawancara dengan Saturnino Tilman dan Mateus Conceição
330. Pernyataan HRVD 01506, 01576 dan 01587; dan CAVR, Profil Komunitas, Manus, Desa Taitudak, Sub-distrik Alas, Distrik Manufahi, 4 Oktober 2002.
331. Pernyataan HRVD 04750 dan 05410; CAVR, Profil Komunitas, Letefoho, Sub-distrik Same, Distrik Manufahi; dan Komunike CRRN, 25 Juli 1983.
332. Pernyataan HRVD 05153, 03429, 04071 dan 03427; dan CAVR, Profil Komunitas, Debu-Waen, Desa Mahaquidan, Sub-distrik Alas, Distrik Manufahi. [3 Desember 2003]
333. Pernyataan HRVD 03401, 03403, 03429, 04071 dan 04088; CAVR, Profil Komunitas, Uma Metan, Desa Mahaquidan, Subdistrik Alas, Distrik Manufahi; dan Ringkasan Kasus: Pembantaian di Uma Metan. (Ikhtisar Kasus: Pembantaian di Uma Metan)
334. Pernyataan HRVD 4073, 4081 dan 4085; dan CAVR, wawancara dengan Saturnino Tilman.

335. Pernyataan HRVD 04088, 04071, 04069 dan 04100; dan Ringkasan Kasus: Pembantaian di Uma Metan. (Ikhtisar Kasus: Pembantaian di Uma Metan)
336. Pernyataan HRVD 06621, 06525, 06610; dan CAVR, Profil Komunitas, Desa Manumera, Sub-distrik Turiscaí, Distrik Manufahi, 12 Agustus 2003.
337. Pernyataan HRVD 03491 dan 03790; dan CAVR, Profil Komunitas, Desa Manumera, Sub-distrik Turiscaí, Distrik Manufahi, 12 Agustus 2003.
338. Pernyataan HRVD 03464; dan CAVR, Profil Komunitas, Desa Caicasa, Sub-distrik Fatuberliu, Distrik Manufahi.
339. CAVR, Profil Komunitas Desa Fatucahi, Sub-distrik Fatuberliu, Distrik Manufahi.
340. Pernyataan HRVD 03424.
341. Pernyataan HRVD 03482 dan 03278; CAVR, Profil Komunitas, Desa Clacuc, Sub-distrik Fatuberliu, Distrik Manufahi.
342. Pernyataan HRVD 03474 dan 03492.
343. Pernyataan HRVD 03471.
344. Pernyataan HRVD 05759; dan CAVR, wawancara dengan Bernardo da Costa dan Elizio Teofilo dan Maria José da Costa, kesaksian pada CAVR, Pemeriksaan Umum Nasional tentang Kelaparan dan Pemindahan Paksa, 28-29 Juli 2003.
345. Lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 04185, 04200, 07450 dan 07458.
346. Pernyataan HRVD 04815
347. Pernyataan HRVD 06093; lihat juga Wawancara CAVR dengan Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak, Dili, 9 Juni 2004.
348. Lihat *Informação Sobre A Situação De Algumas Zonas de Timor Leste*, Dili, 13 Mei 1982 (dokumen diserahkan pada CAVR oleh Anthony Goldstone); dan *Informações*, Submisi Napoleão de Almeida untuk CAVR, 25 Mei 2004.
349. *Informações*, op.cit.
350. CAVR, Profil Komunitas, Desa Macadique, Sub-distrik Uatolari, Distrik Viqueque (tanpa tanggal).
351. Lucio Meneses Lopes, kesaksian pada CAVR, Pemeriksaan Umum Nasional tentang Pembunuhan Massal, Dili, 19-21 November 2003.
352. Pernyataan HRVD 3894, 0552, 3888, 3514, 5112
353. Pernyataan HRVD 3514.
354. Lihat Pernyataan HRVD 2166 and 3759.
355. Pernyataan HRVD 6490.
356. Pernyataan HRVD 6068, 3894 dan 3888; dan CAVR, Wawancara dengan Aleixo Ximenes, Dili, 2 Februari 2004.
357. CAVR, Wawancara dengan Aleixo Ximenes, Dili, 2 Februari 2004; dan Pernyataan HRVD 3733.
358. Pernyataan HRVD 3033.
359. Pernyataan HRVD 9004.
360. Lihat Shepard Forman, Statement to US Congress Sub-committee on International Organisations, Hearings on Human Rights in East Timor, [Pernyataan kepada Sub Komite Kongres Amerika Serikat menyangkut Organisasi Internasional, Dengar Pendapat tentang Hak Asasi Manusia di Timor-Timur], 28 Juni 1977, h.1719.
361. Laporan Kegiatan di Uaibitae, Submisi rahasia kepada CAVR.
362. Laporan Kegiatan di Uaibitae; dan CAVR, Wawancara dengan Abílio Quintão Pinto, Dili, 7 Oktober 2003 and Augusto Pires, Baucau, 14 Maret 2004.
363. CAVR, Wawancara dengan Marito Reis, Baucau, 23 September 2003.
364. CAVR, Wawancara dengan Jacinto A. Junior, Baucau, 28 Mei 2004; Helena Freitas da Silva and J. Francisco, Dili, 2004; Luis da Costa, Lisbon Portugal, 15 Oktober 2003; dan Augusto Pires, Baucau, 14 Maret 2004.
365. CAVR, Wawancara dengan Marito Reis, Baucau, 23 September 2003.
366. CAVR, Wawancara dengan Luis da Costa, Lisbon, Portugal, 15 Oktober 2003.
367. CAVR, Wawancara dengan Marito Reis, Baucau, 23 September 2003; Aleixo Ximenes, 28 Mei 2004; Luis da Costa, Lisbon, Portugal, 15 Oktober 2003.
368. CAVR Wawancara dengan Luis da Costa, Lisbon, Portugal, 15 Oktober 2003 dan John G. Taylor, *East Timor: The Price of Freedom*, Zed Books, London, 1991, h. 96.

369. Pernyataan HRVD 0570; dan CAVR, Wawancara dengan Agostinho Boavida Ximenes (Sera Malik), Soe (Timor Barat), 28 Agustus 2004.
370. Pernyataan HRVD 4444
371. CAVR, Profil Komunitas Iliomar II (Iliomar, Lautém) dan Pernyataan HRVD 3962 dan 3969.
372. CAVR, Profil Komunitas Iliomar II (Iliomar, Lautém) dan Pernyataan HRVD 3982
373. Pernyataan HRVD 6386 dan 9471.
374. Pernyataan HRVD 9471, 6354, 6395 dan 6407.
375. CAVR, Wawancara dengan Eduardo de Jesus Barreto, Ermera, 12 Agustus 2003, dan Celestino Alves, Fatubessi, Ermera, 6 Oktober 2003
376. CAVR, Wawancara dengan Jeronimo Albino, Ermera, 10 September 2003; lihat juga Pernyataan HRVD 8385.
377. Pernyataan HRVD 6395.
378. CAVR, Wawancara dengan Celestino de Carvalho Alves, Fatubessi, Ermera, [tidak bertanggal], dan Fatubessi, Ermera, 27 Juni, 2004.
379. A Nossa Vitoria É Apenas Questão de Tempo, Comunicado do Comité Central da Fretilin de 14/9/77, Edições Comité de 28 de Novembro, Lisbon, Maret 1978, h.8-9 dan 15. [Original: "o mais vil traidor que a nossa Historia conhece."]
380. "A Nossa Vitoria", h. 14, dan Domingos Maria Alves (Ambulan), kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, Dili, 19-21 November 2003
381. "A Nossa Vitoria", h. 15.
382. CAVR, Wawancara dengan Jeronimo Albino, Ermera, 10 September 2003; dan Eduardo de Jesus.
383. CAVR, Wawancara dengan João Soares, Atara, Atsabe, Ermera, 24 September 2003.
384. CAVR, Wawancara dengan Maria Fatima Vaz de Jesus, Bebora, Dili, 23 September 2004.
385. CAVR, Wawancara dengan Maria Fatima Vaz de Jesus, Bebora, Dili, 23 September 2004; dan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
386. CAVR, Wawancara dengan Bernardo da Costa, 5 September 2003; dan Maria Fatima Vaz de Jesus, Bebora, Dili, 23 September 2004.
387. Pernyataan HRVD 5758.
388. Thomas Araújo, Ringkasan Kasus No.908, Kotomori, (Remexio Aileu) [tidak bertanggal]
389. CAVR, Wawancara dengan Francisco Xavier Amaral, Dili 18 Juni 2004
390. Pernyataan HRVD 8100 dan 5812.
391. Pernyataan HRVD 7902.
392. Pernyataan HRVD 0166, 9120, 4882, 4875, 4878 dan 5745.
393. Pernyataan HRVD 4878.
394. Domingos Maria Alves (Ambulan), kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, Dili, 19-21 November 2003; CAVR, Wawancara dengan Antonio de Amado Jesus Ramos Guterres, Lacló, Manatuto, 11 Desember 2003; Antonio Amado de Jesus Ramos Guterres, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, Dili, 19-21 November 2003; dan Pernyataan HRVD 5758, 9120 dan 5063.
395. António Amado de Jesus Ramos Guterres, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, Dili, 19-21 November 2003.
396. Domingos Maria Alves (Ambulan), kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, Dili, 19-21 November 2003.
397. Pernyataan HRVD 8100.
398. Pernyataan HRVD 5807.
399. CAVR, Wawancara dengan Antonio Amado de Jesus Ramos Guterres, Lacló, Manatuto, 6 November, 2003; Antonio Amado de Jesus Ramos Guterres, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, Dili, 19-21 November 2003.
400. Pernyataan HRVD 8100.
401. Pernyataan HRVD 5812.
402. Pernyataan HRVD 5810; dan CAVR, Profil Komunitas Desa Faturasa, Subdistrik Remexio, Distrik Aileu, 20 Juni 2003.
403. Pernyataan HRVD 5760.

404. CAVR, Wawancara dengan Antonio Amado de Jesus Ramos Guterres, Lacló, Manatuto, 6 November 2003.
405. Lihat 7.4.4.2 dan CAVR, Profil Komunitas Desa Hoholau, Subdistrik Aileu Kota, Distrik Aileu; dan Desa Lausi/Bandudato, Subdistrik Aileu Kota, Distrik Aileu, 16 Februari 2004
406. Pernyataan HRVD 6995, 4830 dan 5063.
407. Pernyataan HRVD 6504, 7902, 8002 dan 8010.
408. Pernyataan HRVD 5712.
409. Pernyataan HRVD 3203.
410. Tentang Laclubar dan Natarbora, lihat Pernyataan HRVD 5771, 5056 dan 5279; tentang Metinaro lihat Pernyataan HRVD 5056 dan; CAVR, Wawancara dengan Antonio Amado de Jesus Ramos Guterres, Lacló, Manatuto, 6 November 2003.
411. Domingos Maria Alves (Ambulan), kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, Dili, 19-21 November 2003; dan Pernyataan HRVD 0802
412. Pernyataan HRVD 4815.
413. Di antara mereka yang selamat adalah Tobias Mendonça, Jorgé dan Thomás Araújo (Pernyataan HRVD 4882 dan 4815); dan CAVR, Wawancara dengan Thomás Araújo, Turiscaí, 14 Oktober 2003
414. Domingos Maria Alves (Ambulan), kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, Dili, 19-21 November 2003; dan Thomás Araújo, Turiscaí, 14 Oktober 2003
415. Pernyataan HRVD 8002.
416. Pernyataan HRVD 4815; CAVR, Profil Komunitas Desa Ahic, Subdistrik Lacluta, Distrik Viqueque, 22 November 2002
417. Pernyataan HRVD 5807, 5810, 5811.
418. CAVR, Wawancara dengan Jacinto A. Junior, Baucau, 28 Mei 2004; Dokumen Quelicai Uaibitae, submisi kepada CAVR oleh Anthony Goldstone; dan Pernyataan HRVD 7442, 7443 dan 7588.
419. CAVR, Wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
420. CAVR, Wawancara dengan Jacinto A. Junior, Baucau, 28 Mei 2004.
421. Pernyataan HRVD 7512.
422. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
423. Pernyataan HRVD 4158, 7442 dan 7443; CAVR, Wawancara dengan Jacinto A. Junior, Baucau, 28 Mei 2004; dan Dokumen Quelicai Uaibitae, submisi kepada CAVR oleh Anthony Goldstone.
424. Pernyataan HRVD 7442 dan 7443.
425. Sarah Niner (ed), *To Resist is to Win!: The Autobiography of Xanana Gusmão*, h. 49-50.
426. Pernyataan HRVD 0095.
427. CAVR, Profil Komunitas Desa Uaitame, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau; CAVR, Wawancara dengan Agostinho Boavida Ximenes (Sera Malik), Soe (Timor Barat), 28 Agustus 2004.
428. Pernyataan HRVD 3804 dan 3818.
429. Pernyataan HRVD 6033. Lihat juga Pernyataan HRVD 7443.
430. Dokumen Quelicai Uaibitae, Submisi kepada CAVR oleh Anthony Goldstone.
431. Pernyataan HRVD 7588.
432. Lihat sebagai contoh Pernyataan HRVD 2992, 8225, 5771, 7837, 7990 dan 8022.
433. Untuk beberapa kasus ini, lihat Pernyataan HRVD 4899, 6995, 2231, 8022, 5712, 6938, 0128 dan 3900.
434. Lihat, sebagai contoh, CAVR, Wawancara dengan Antonio Amado de Jesus Ramos Guterres, Lacló, Manatuto, 11 Desember 2003; José Manuel do Santos, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004; dan José Manuel Monteiro, Remexio, 6 Oktober 2004; dan Pernyataan HRVD 6033, 0114, 5056, 7902, 1502, 6995, 2086, 3818, 2056, 7902 dan 4878, 2195, 3160, 3179, 2056, 6498, dan 0200.
435. Antonio Amado de Jesus Ramos Guterres, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, Dili, 19-21 November 2003.
436. CAVR, Wawancara dengan Egas da Costa, Dili, 19 Mei 2004.
437. Pernyataan HRVD 6641.
438. Pernyataan HRVD 3157 dan 3160.
439. Pernyataan HRVD 7704, 6033, 5056, 2195 dan 5056.
440. Pernyataan HRVD 0114, 2086, 3818 dan 0200.

441. Pernyataan HRVD 0200 dan CAVR, Wawancara dengan Maria Fatima Pinto, Dili, 31 Mei 2004.
442. Pernyataan HRVD 6938.
443. Lihat juga CAVR, Wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
444. CAVR, Wawancara dengan Antonio Amado de Jesus Ramos Guterres, Laclo, Manatuto, 11 Desember 2003; dan Pernyataan HRVD 3804, 3818, 5842 dan 8024.
445. Pernyataan HRVD 3804 dan 3818.
446. Pernyataan HRVD 5842, 8024, 3804 dan 3818.
447. Pernyataan HRVD 8024.
448. Pernyataan HRVD 0128.
449. Pernyataan HRVD 3179, 9093, 3562 dan 3597.
450. Pernyataan HRVD 3179.
451. Pernyataan HRVD 2123 dan 3858.
452. Pernyataan HRVD 2203.
453. Pernyataan HRVD 4675.
454. Pernyataan HRVD 2043.
455. Pernyataan HRVD 3159.
456. Pernyataan HRVD 3045.
457. CAVR, Profil Komunitas Desa Raça, Subdistrik Lospalos, Distrik Lautém
458. Pernyataan HRVD 2137.
459. Pernyataan HRVD 3824.
460. Pernyataan HRVD 0418.
461. Pernyataan HRVD 4384.
462. Pernyataan HRVD 4479 dan CAVR, Profil Komunitas, Laclo, Subdistrik Atsabe, Distrik Ermera. 26 Juni 2003
463. Angelo Araújo Fernandes, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, Dili, 19-21 November 2003.
464. Pernyataan HRVD 0633 dan 3033.
465. Pernyataan HRVD 3906.
466. Pernyataan HRVD 5028.
467. Pernyataan HRVD 8013
468. Pernyataan HRVD 3808.
469. Pernyataan HRVD 8607.
470. Pernyataan HRVD 4384.
471. Pernyataan HRVD 4610
472. Pernyataan HRVD 0403, 2719, 4187, 4992, 3974, 5771, 2056, 1902, 4095, 1711, 3027, 6950, 4604, 5567, 2148, 6950, 6490, 4384, 7612, 9093 dan 3114.
473. CAVR, Wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
474. Lihat, sebagai contoh Pernyataan HRVD 6950, 4604, 9093 dan 4148.
475. *A Nossa Vitoria*, h. 20.
476. Pernyataan HRVD 4148.
477. CAVR, Profil Komunitas aldeia Puno, Desa Pairara, Subdistrik Moro, Distrik Lautém.
478. Pernyataan HRVD 2056.
479. Pernyataan HRVD 4095. Sebagai contoh, lihat Pernyataan HRVD 2179, 4498, 3114 dan 1902.
480. Pernyataan HRVD 2778.
481. Pernyataan HRVD 7149.
482. Pernyataan HRVD 2148.
483. Pernyataan HRVD 7612.
484. Pernyataan HRVD 2098.
485. Pernyataan HRVD 5783 dan 4188.
486. Pernyataan HRVD 4188.
487. Pernyataan HRVD 0615 dan 0616.

488. CAVR, Profil Komunitas *Aldeia-aldeia* Suhu-Rama, Inur Fuik, Subdistrik Nain Feto, Distrik Dili.
489. Pernyataan HRVD 4087.
490. Xanana Gusmão, *To Resist is to Win!*, Aurora Books, Melbourne, 2000, hal. 68.
491. Moerdani, artikel dalam Koran *Sinar Harapan*, 17 August 1983, dikutip dalam Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, h. 143.]
492. Wawancara CAVR dengan Bernadino Villanova, Ataúro, Dili, 7 Maret 2002.
493. Profil Komunitas CAVR, Dare, Vera Cruz, Barat Dili.
494. Profil Komunitas CAVR, Desa Benamauk, Camea dan Fatuahi, Sub-distrik Cristo Rei, Distrik Dili
495. Profil Komunitas CAVR, Becora/Culuhun, Sub-distrik Cristo Rei, Dili Timur.
496. Pernyataan HRVD 00177; lihat juga wawancara dengan Justino Mota, Lisabon, 3 Juli 1984 (Submisi kepada CAVR oleh Anthony Goldstone).
497. Pernyataan HRVD 09471, 08311, 08063, 08275; Wawancara Neil Barrett dengan David Ximenes; dan "En Nome de Presos de 10/6/80", CRRN Communiqué, 13 Juli 1983; Wawancara dengan Antonio Barbosa, Lisabon, 5 April 1985 (Submisi kepada CAVR oleh Anthony Goldstone).
498. Pernyataan HRVD 00072; dan wawancara dengan Antonio Barbosa, Lisabon, 5 April 1985 (Submisi kepada CAVR oleh Anthony Goldstone).
499. Wawancara CAVR dengan Maria de Fatima Martins, Seloi Malere, Aileu, tidak ada tanggal; dan Pernyataan HRVD 03217.
500. Profil Komunitas CAVR, Hera, Subdistrik Cristo Rei, Dili Timur; dan Becora/Culuhun, Subdistrik Cristo Rei, Dili Timur.
501. Pernyataan HRVD 01626; dan "En Nome de Presos de 10/6/80", CRRN Communiqué, 13 Juli 1983.
502. Wawancara Neil Barrett dengan Maria Imaculada Araújo; Laporan Amnesty International, 1985; dan "En Nome de Presos de 10/6/80", CRRN Communiqué, 13 Juli 1983.
503. Wawancara Neil Barrett dengan David Ximenes.
504. Pernyataan HRVD 05655; Wawancara Neil Barrett dengan Maria Fatima Pinto dan Maria Imaculada Araújo.
505. Pernyataan HRVD 00072.
506. Pernyataan HRVD 00076.
507. Wawancara Neil Barrett dengan David Ximenes, Dili, 2003.
508. Wawancara Neil Barrett dengan David Ximenes dan Maria Fatima Pinto Pernyataan HRVD 00076, 04864 dan 08063.
509. Pernyataan HRVD 03490 dan 06983; dan "En Nome de Presos de 10/6/80", CRRN Communiqué, 13 Juli 1983.
510. Pernyataan HRVD 03490; dan Wawancara Neil Barrett dengan David Ximenes.
511. Pernyataan HRVD 08735.
512. Wawancara Neil Barrett dengan Maria Imaculada Araújo, Dili 2003.
513. Pernyataan HRVD 08275.
514. Pernyataan HRVD 08031; dan Profil Komunitas CAVR, Suhu-Rama, Inur Fuik, Sub-distrik Nain Feto, Distrik Dili Timur.
515. Wawancara CAVR dengan José Simões, Dili, 9 Maret 2004.
516. Surat dari Monsignor Martinho da Costa Lopes kepada Leo Sukata, Uskup Agung Jakarta, 12 Juli 1980 (Submisi kepada CAVR oleh Anthony Goldstone).
517. Pernyataan HRVD 09011 dan 05010.
518. "En Nome de Presos de 10/6/80", CRRN Communiqué, 13 Juli 1983.
519. Pernyataan HRVD 03121 dan 00072; dan "En Nome de Presos de 10/6/80", CRRN Communiqué, 13 Juli 1983.
520. Pernyataan HRVD 06961.
521. Pernyataan HRVD 06941.
522. Pernyataan HRVD 05735, 06959 dan 06995.
523. Profil Komunitas CAVR, Suhu-Rama, Inur Fuik, Sub-distrik Nain Feto, Dili Timur; Pernyataan HRVD 05078 dan 08031.
524. Pernyataan HRVD 06956.
525. Wawancara CAVR dengan Anselmo Fernandes Xavier, Com, Lautém, 10 Oktober 2003.

526. Wawancara CAVR dengan Abílio Quintão Pinto, Iliomar, Lautém, 7 Oktober 2003.
527. Pernyataan tertulis diberikan kepada CAVR oleh Fernando Ximenes, Ossu, 2 Oktober 2003.
528. Pernyataan HRVD 01459.
529. Pernyataan HRVD 04877.
530. Wawancara CAVR dengan João Bosco dan Valdemar Sarmento, 14 Juli 2003; Raimundo Hornay Ximenes, Fatuberliu, Manufahi, 20 Oktober 2003; Pernyataan HRVD 00427.
531. Pernyataan tertulis diberikan kepada CAVR oleh Fernando Ximenes, Ossu, 2 Oktober 2003.
532. Xanana Gusmão, *To Resist is to Win!*, Aurora Books, Melbourne, 2000, halaman 67-68.
533. Wawancara CAVR dengan José de Jesus dos Santos, Dili, 28 Juni, 2004; dan Cancio da Costa Viegas, 25 September 1981.
534. Wawancara CAVR dengan Anacleto Ximenes, Cairui, Manatuto, 12 Maret 2004 dan Sebastião da Cunha, Manatuto, 12 Mei 2004.
535. Wawancara CAVR dengan Sebastião da Cunha, Manatuto, 12 Mei 2004 dan José de Jesus dos Santos, Dili, 28 Juni 2004.
536. Wawancara CAVR dengan Sebastião da Cunha, Manatuto, 12 Mei 2004.
537. Wawancara CAVR dengan Anacleto Ximenes, Cairui, Manatuto, 12 Maret 2004.
538. Pernyataan HRVD 07101.
539. Pernyataan HRVD 04424, 01628, 00801, 05346, dan 05331.
540. Pernyataan HRVD 07599.
541. Pernyataan HRVD 05340.
542. Pernyataan HRVD 05358.
543. Pernyataan HRVD 06780.
544. Wawancara CAVR dengan Dinis Amaral, Dare, Ainaro, 1 Juni 2003.
545. Wawancara CAVR dengan Adelino de Araújo, Mauchiga, Ainaro, 29 Mei 2003.
546. Wawancara CAVR dengan Ana Britos, Mauchiga, Ainaro, 31 Mei 2003.
547. Pernyataan 6 dari Tim Penelitian CAVR, Laporan Lapangan Ainaro, Dili, 16 Januari 2003; lihat juga CAVR, Profil Komunitas Desa Mulo, Subdistrik Dare, Ainaro, 2 Februari 2004.
548. CAVR, Profil Komunitas Desa Mulo, Subdistrik Dare, Ainaro, 2 Februari 2004.
549. Komunike CRRN, Juli 1983.
550. Pernyataan HRVD 07181.
551. Pernyataan HRVD 07241.
552. Pernyataan HRVD 07242.
553. Pernyataan HRVD 07253.
554. Pernyataan HRVD 07256.
555. Pernyataan HRVD 07177; 07186; dan daftar CAVR yang disusun dari batu-batu nisan di Ainaro.
556. Pernyataan 6 dari CAVR, Tim Penelitian, Laporan Lapangan Ainaro, Dili, 16 Januari 2003.
557. Pernyataan 6 dari CAVR, Tim Penelitian, Laporan Lapangan Ainaro, Dili, 16 Januari 2003.
558. CAVR, Profil Komunitas Desa, Distrik Ainaro, 17 September 2004.
559. Wawancara CAVR dengan XH, Mauchiga, Ainaro, 17 Maret 2003.
560. CAVR, Profil Komunitas Nunumogue, Ainaro, 4 Februari 2004.
561. "Daftar korban di Mauxiga, 1982," Submisi kepada CAVR dari Abílio dos Santos Belo, 3 Juni 2003.
562. Lihat Tim Penelitian CAVR, Laporan Lapangan Ainaro, Dili, 16 Januari 2003.
563. Pernyataan HRVD 02803; 03343; 09152.
564. Wawancara CAVR dengan Duarte Gaspar Corte Real, Ainaro, 22 Oktober 2003.
565. Profil Komunitas Bibileo (Viqueque, Viqueque).
566. Profil Komunitas Bibileo (Viqueque, Viqueque).
567. Wawancara CAVR dengan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004; wawancara CAVR dengan Geronimo da Costa Amaral, Viqueque, 10 Maret 2004; and "Interview with Mário Carrascalão," *Indonesia*, No. 76, Oktober 2003.
568. Pernyataan HRVD 03072; 06062.
569. Pernyataan HRVD 09035; 06039; 07340; Wawancara CAVR dengan Honorio Soares de Gonzaga, Lalerek Mutin, Viqueque, 10 Maret 2004.

570. Wawancara CAVR dengan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004
571. Wawancara CAVR Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004.
572. Wawancara CAVR dengan Jerónimo da Costa Amaral, Viqueque, 10 Maret 2004.
573. Serious Crimes Unit, Wawancara dengan José da Costa Carvalho.
574. Wawancara CAVR dengan Olinda Pinto Martins, Lalerek Mutin, Viqueque, 8 November 2003; lihat juga Wawancara Serious Crimes Unit dengan Jacinto Gomes (Leki Rubi), Viqueque (Viqueque), 11 April 2001, dan Antonio Soares (Toni Rubik), Viqueque (Viqueque), 11 April 2001.
575. Lihat Wawancara CAVR dengan José Gomes, Lalerek Mutin, Viqueque, 8 Desember 2003.
576. Wawancara CAVR dengan Domingos Amaral, Luca, Viqueque, 18 Juli 2003. Lihat juga Pernyataan HRVD 06025.
577. Pernyataan HRVD 04203.
578. Pernyataan HRVD 04205.
579. Pernyataan HRVD 06050, 06001, 06809, 06798, 07332, 07522, 07523, dan 07373.
580. Pernyataan HRVD 07333.
581. Pernyataan HRVD 04142.
582. Pernyataan HRVD 03134.
583. Pernyataan HRVD 04140.
584. Pernyataan HRVD 03051.
585. Wawancara CAVR dengan Aleixo Rogerio José, Lugasa, Viqueque, 14 Desember 2003.
586. Wawancara CAVR dengan Isabel da Silva, Beaço, Viqueque, 14 Desember 2003.
587. Pernyataan HRVD 06036; 07432; 07436; 07459; 07482; 07517; dan 07518; lihat pula Wawancara CAVR dengan Mateus da Silva, Uatolari, Uatolari, Viqueque, 4 Oktober 2003.
588. Pernyataan HRVD 07465.
589. Pernyataan HRVD 07354.
590. Pernyataan HRVD 04143.
591. Pernyataan HRVD 04123; 04144.
592. Wawancara CAVR dengan Julio dos Santos, Dili, 15 Oktober 2004.
593. Wawancara CAVR dengan António dos Santos, Mehara, 10 Oktober 2003; Pernyataan HRVD 00791.
594. Lihat Wawancara CAVR dengan Gaspar Seixas dan Fernando Amaral; dan Dokumen No. 4/Ag/84, Submisi kepada CAVR dari Anthony Goldstone.
595. CAVR, Laporan Hasil Tim Penelitian Pemindahan Paksa dan Kelaparan di Sub-distrik Iliomar, 27 Mei-4 Juni 2003.
596. Profil Komunitas, Iliomar II, Iliomar, Lautém.
597. Profil Komunitas Iliomar I, Ailebere dan Fuat (semuanya di subdistrik Iliomar, Lautém).
598. Profil Komunitas Tirilolo dan Ailebere (keduanya Iliomar, Lautém).
599. Berkas pengadilan Zé Roberto Seixas Miranda Jeronimo (No: 57/PID/B/1984/PN.DIL).
600. Pernyataan HRVD 04371; lihat pula Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, 2003, halaman 25.
601. Profil Komunitas Iliomar I; Pernyataan HRVD 03918; 04446; 03973; 04371; dan 03985; dan Berkas pengadilan Zé Roberto Seixas Miranda Jeronimo (No: 57/PID/B/1984/PN.DIL).
602. Pernyataan HRVD 03925; 02113; 03924; 03912; 03949; 03986; 03997; 04371; lihat pula Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, halaman 25.
603. Pernyataan HRVD 03928; lihat pula Pernyataan HRVD 09198.
604. Pernyataan HRVD 04406; 03911; lihat pula Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, 2003, halaman 25.
605. Pernyataan HRVD 03960; 03946; 04008; 03920; lihat pula Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, 2003, halaman 25.
606. Profil Komunitas Cainliu (Iliomar, Lautém).
607. Pernyataan HRVD 03946; 04401; 04008; 04406.
608. Pernyataan HRVD 03997; 03973; 09171; 04440.
609. Pernyataan HRVD 00791.
610. Profil Komunitas, Mehara (Tutuala, Lautém).
611. Pernyataan HRVD 00737; 00761.
612. Pernyataan HRVD 09151.

613. Pernyataan HRVD 00761; 00726; 00727.
614. Pernyataan HRVD 00707. Pembunuhan-pembunuhan pada 25 November diuraikan dalam Pernyataan HRVD 00746; 00761; 07092; 00763; dan 00755.
615. Lihat Dokumen No. 4/Ag/84, submisi kepada CAVR dari Anthony Goldstone.
616. Lihat Pernyataan HRVD 07582.
617. Pernyataan HRVD 01646.
618. Gracilda Quimareas, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penahanan, Dili; lihat pula Pernyataan HRVD 00777; 00784; 00787; 09151.
619. Lihat Doc No. 4/Ag/84, submisi Anthony Goldstone kepada CAVR.
620. See Doc No. 4/Ag/84, submisi Anthony Goldstone kepada CAVR. Pernyataan HRVD 05330.
621. Pernyataan HRVD 02794; Wawancara CAVR dengan Raul da Costa Pite, Lore (Lospalos, Lautém), 9 Oktober 2003.
622. Pernyataan HRVD 05320, 05330 and 02794; Wawancara CAVR dengan Raul da Costa Pite, Lore (Lospalos, Lautém), 9 Oktober 2003; dan Dokumen No. 4/Ag/84, Submisi kepada CAVR dari Anthony Goldstone.
623. Pernyataan HRVD 05399.
624. Pernyataan HRVD 05400.
625. Pernyataan HRVD 07592.
626. Pernyataan HRVD 01674; 05350; 07591 walaupun nama-nama agak berbeda.
627. Pernyataan HRVD 07595.
628. Pernyataan HRVD 00768.
629. Pernyataan HRVD 02295.
630. Pernyataan HRVD 07606; 07613. Pernyataan 07604 menyebutkan bahwa António dan Pedro dibunuh pada tahun 1984.
631. Pernyataan HRVD 07613.
632. Pernyataan HRVD 07801.
633. Pernyataan HRVD 08748.
634. Pernyataan HRVD 08726.
635. Pernyataan HRVD 07618; lihat Dokumen No. 4/Ag/84, Submisi kepada CAVR dari Anthony Goldstone; lihat pula Wawancara CAVR dengan Julio dos Santos, Dili, 15 Oktober 2004.
636. Lihat wawancara CAVR dengan Gonzalo da Silva, 8 Oktober 2003.
637. Mariana Marques, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 18-21 November 2003.
638. Pernyataan HRVD 02789.
639. Pernyataan HRVD 05355.
640. Pernyataan HRVD 02344; 02310; 02369.
641. Pernyataan HRVD 02310; 0609.
642. Pernyataan HRVD 06114.
643. Pernyataan HRVD 00584.
644. Pernyataan HRVD 08117.
645. Pernyataan HRVD 00553.
646. Pernyataan HRVD 07050.
647. Pernyataan HRVD 08601.
648. Pernyataan HRVD 02401; 03808.
649. "Surat dari Pendeta di Timor Timur 14 Juli, 1984," Submisi kepada CAVR oleh Anthony Goldstone; Pernyataan HRVD 07679; 08610.
650. Pernyataan HRVD 03834.
651. Pernyataan HRVD 07060.
652. Pernyataan HRVD 02374; 02373.
653. Pernyataan HRVD 05234.
654. Pernyataan HRVD 08762.
655. Pernyataan HRVD 08039.

656. Pernyataan HRVD 00182.
657. Pernyataan HRVD 06767.
658. Pernyataan HRVD 05776.
659. Pernyataan HRVD 05024.
660. Pernyataan HRVD 03602 dan 07064; Wawancara CAVR dengan Henrique Belmiro, 25 Mei 2004, Comoro, Dili; Submisi Assepol kepada CAVR; Tahanan Politik di Timor-Leste, 25 April 1974 - September 1999; Wawancara dengan Antonio Tomàs Amaral da Costa (Antonio Aitahan Matak), Dili, 16 Oktober 1984
661. Pernyataan HRVD 01437.
662. Pernyataan HRVD 01410; 04154; 01407; 01408; 01454; 01471.
663. Pernyataan HRVD 04772.
664. Pernyataan HRVD 03430.
665. Pernyataan HRVD 04807; 04783.
666. Pernyataan HRVD 04787.
667. Pernyataan HRVD 04772.
668. Pernyataan HRVD 09044.
669. Pernyataan HRVD 03437; 03452; 03476; 03430; 04024.
670. Pernyataan HRVD 03782.
671. "Laporan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Distrik Ainaro terutama pada bulan Mei 1984," fotokopi di CAVR, tertanggal Juni 1984.
672. Pernyataan HRVD 02803; 02051.
673. Pernyataan HRVD 03341; 03343; 09152.
674. Wawancara dengan Duarte Gaspar Corte Real, Ainaro, 22 Oktober 2003.
675. Wawancara dengan Olandino Guterres, Dili, Juni 2004.
676. Pernyataan-pernyataan HRVD 05156; 05157; 05169; 06681; 07168; 07172; 08143; 08182; 08187 melaporkan kasus orang-orang yang ditahan di Bobonaro dan Zumalai selama 1984 dan dibawa ke Koramil di Bobonaro.
677. Wawancara CAVR dengan Lucio Dinis Marques, Raifun, Maliana, Bobonaro, 13 Juni 2003
678. Wawancara dengan Armando dos Santos, Maliana, 13 Juni 2003.
679. Pernyataan HRVD 05156.
680. Pernyataan HRVD 05203.
681. Pernyataan HRVD 08553.
682. Pernyataan HRVD 03695.
683. Pernyataan HRVD 07172; 08143.
684. Pernyataan HRVD 07172. Wawancara CAVR dengan Olandino Guterres, Dili, 7 Juni 2004
685. "Relacao de acusados e mortos pelas forcas da Indonesia em Koramil de Bobonaro no Ano de 1984," Laporan tentang dugaan pembunuhan oleh militer Indonesia di Koramil Bobonaro pada 1984) Submisi kepada CAVR oleh Armando dos Santos, Maliana, Bobonaro, 13 Juni 2003.
686. Pernyataan HRVD 00924.
687. Pernyataan HRVD 02108.
688. Pernyataan HRVD 00965.
689. Pernyataan HRVD 00970.
690. Pernyataan HRVD 00992.
691. Pernyataan HRVD 00946.
692. Pernyataan HRVD 01000.
693. Pernyataan HRVD 00205; 03547.
694. Pernyataan HRVD 05323.
695. Pernyataan HRVD 07661.
696. Pernyataan HRVD 03902.
697. Pernyataan HRVD 07444.
698. Pernyataan HRVD 07602.
699. Amnesty International, 21 Desember 1987.

700. Pernyataan HRVD 04161.
701. Pernyataan HRVD 6022; wawancara dengan Roque Soares Pinto, Beaco (Viqueque) 3 Oktober 2003.
702. Pernyataan HRVD 3916.
703. Pernyataan HRVD 1612; wawancara dengan Julio dos Santos, Dili, 15 Oktober 2004. Menurut Julio, Joséfina dibunuh pada tahun 1985.
704. Pernyataan HRVD 6029.
705. Pernyataan HRVD 0427.
706. Pernyataan HRVD 6052.
707. Pernyataan HRVD 1605.
708. HRVD Statement 1640; wawancara dengan Julio dos Santos, Dili, 15 Oktober 2004.
709. Pernyataan HRVD 4437; CAVR, Profil Komunitas Desa Ailebere, Subdistrik Iliomar, Distrik Lautém, 24 Juli 2003; dan Ernest Chamberlain, *The Struggle in Iliomar: Resistance in Rural East Timor*, h.27-28.
710. Pernyataan HRVD 5320.
711. Pernyataan HRVD 6073.
712. Pernyataan HRVD 2136.
713. Pernyataan HRVD 05349.
714. HRVD Statement 03138.
715. Pernyataan HRVD 09163.
716. Pernyataan HRVD 00436.
717. Pernyataan HRVD 03899.
718. HRVD Statement 6122.
719. Pernyataan HRVD 0585.
720. Pernyataan HRVD 03873.
721. Pernyataan HRVD 4102.
722. Pernyataan HRVD 4716.
723. Pernyataan HRVD 3388.
724. Pernyataan HRVD 1357.
725. Pernyataan HRVD 2164.
726. Pernyataan HRVD 1674.
727. Pernyataan HRVD 9189.
728. Pernyataan HRVD 3771.
729. UNPOL, wawancara Historical Crime Unit dengan Jacinto Alves, 11 Juni 2001.
730. Lihat matriks wawancara yang dilampirkan di Laporan Polisi Militer Ketiga.
731. Wawancara dengan Marcio da Graça Ximenes Cipriano Gonçalves, 28 November 2004. Hal ini didukung oleh kesaksian lain termasuk wawancara Investigasi Nasional UNTAET dengan José João Lemos Aniceto, 21 Maret 2001.
732. Sebagai contoh, lihat Russell Anderson, op. cit.
733. Simplisio Celestino De Deus, kesaksian oral diberikan pada Audiensi Publik CAVR tentang Pembantaian, Kantor Publik CAVR di Dili, 19-21 November 2003.
734. Pengadilan Negara di Dili, Case Dossier (Bundle A), No. 13/Pid/B/1992/PN DIL
735. Wawancara dengan Aviano Antonio Faria, 16 Oktober 2003.
736. Wawancara dengan Antonio Dias
737. Wawancara dengan Inocêncio da Costa Maria Freitas, 27 November 2004.
738. Wawancara dengan Aviano Antonio Faria, 16 Oktober 2003.
739. Pengadilan Negara di Dili, op. cit. hal. 93.
740. Wawancara dengan Fernando Tilman, 28 November 2004.
741. *Asia Watch*, East Timor: The November 12 Massacre and its Aftermath, *Asia Watch Report*, Vol. 3, No. 26, 12 Desember 1991.
742. Advance Report of the National Commission of Inquiry into 12 November 1991 Incident in Dili, 26 Desember 1991. Dalam Heike Krieger (ed.), *East Timor and the International Community: Basic Documents*, [penerbit? Lokasi penerbit?], 1997, hal. 256-259.

743. Komisi Penyelidikan Nasional, Indonesian National Commission of Enquiry.
744. Asosiasi Oikoumenis A Paz e Possivel em Timor Leste [Peace is Possible in East Timor] (Editor), East Timor after Santa Cruz: Indonesia and the International Order. Editor, Lisbon, Portugal, Januari 1993. Commission on Human Rights, Report of the Secretary-General on the Situation in East Timor, 31 Januari 1995, Annex I: Informasi disediakan oleh Pemerintah Indonesia. E/CN.4/1995/72. Estimasi jumlah orang yang terbunuh bervariasi antara 50 sampai 100 sampai 200 sampai 271. Lihat CDPM dan Peace is Possible in East Timor after Santa Cruz, 1993.
745. Lihat tersangka No. 9 dalam 'Hasil Investigasi' yang dilampirkan pada Laporan Polisi Militer Ketiga.
746. Lihat, misalnya, Profil Komunitas Iliomar II (Iliomar, Lautém), yang menyebutkan bahwa 12 orang dari Iliomar, yang menghadiri demonstrasi Santa Cruz, dibunuh atau "hilang".
747. HRVD Statement 2049.
748. HRVD Statements 02049 and 4964.
749. Untuk kuburan-kuburan di Tibar, lihat wawancara-wawancara NIU dengan Paul da Silva de Jesus, 7 April 2001; Matias Guterres 30 Maret 2001; Manuel Soares alias Amanu, 11 Agustus 2001.
750. United Nations, "Report by the Special Rapporteur, Mr. on his mission to Indonesia and East Timor from 3 to 13 July 1994", E/CN.4/1995/61/Add.1, 1 November 1994, Paragraf 69.
751. UN Document E/CN.4/1995/61/Add.1. Selanjutnya disebut Laporan Ndiaye.
752. Ibid.
753. Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions, recommended by Economic and Social Council Resolution 1989/65 of 24 May 1989. Annex, 1989 UN ESCOR Supp. (No. 1) at 52, UN Doc. E/1989/89 (1989). (Prinsip-prinsip mengenai Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pembunuhan di Luar Hukum, Sewenang-wenang dan Seketika, Direkomendasikan oleh Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1989/65 tanggal 24 Mei 1989).
754. Surat Perintah Penyidikan No.POL: SPRIN/1090/XI/1991/SERSE.
755. Laporan Polisi No.POL:LP/611/XI/1991/PAMAPTA.
756. Daftar Barang Bukti, dibuat oleh M. Tutuhaturunewa.
757. Laporan Polisi Militer yang Kedua, infra.
758. Laporan Ndiaye, para. 52.
759. Ibid. para. 56.
760. Ibid. para. 57.
761. Pernyataan dari Joana Dias, 4 Agustus 2001, diberikan kepada Polisi Sipil UNTAET; Pernyataan dari Simao Pedro Ribeiro, 12 Agustus 2001, diberikan kepada Polisi Sipil UNTAET.
762. Laporan Polisi Militer yang Pertama: *Laporan Khusus tentang Resume Singkat Hasil Pemeriksaan Para Petugas Pengendali Unjuk Rasa Kelompok Anti Integrasi dan Pendukungnya pada tanggal 12 November 1991, Nomor: Lapsus/487/XI/1991*, 26 November 1991, oleh Polisi Militer Daerah Militer IX, Udayana, Detasemen IX/4;
Laporan Polisi Militer yang Kedua: *Laporan Pengusutan ke dalam Peristiwa 12 Nopember 1991 Nomor: R/488/XII/1991*, tertanggal Desember 1991, oleh Polisi Militer Daerah Militer IX Udayana, Detasemen-IX/4; dan
Laporan Polisi Militer yang Ketiga: *Laporan-Khusus tentang Hasil Penyelidikan terhadap Petugas PHH pada Demonstrasi tanggal 12 Nopember 1991*, Nomor Lapsus/03/XII/1991, Januari 1992, oleh Polisi Militer Daerah Militer IX, Udayana, Detasemen IX/4.
Laporan-laporan ini ditandatangani dan dicap oleh Wakil Komandan Detasemen IX/4, Mayor Hawas Mu'in.
763. Laporan Polisi no: LP-28/A-22/Detasemen Polisi Militer Unit IX/4/1991, 12 November 1991.
764. Laporan Polisi Militer yang Ketiga: *Laporan-Khusus tentang Hasil Penyelidikan terhadap Petugas PHH pada Demonstrasi tanggal 12 Nopember 1991*, Nomor Lapsus/03/XII/1991, Januari 1992, oleh Polisi Militer Daerah Militer IX, Udayana, Detasemen IX/4. h. 4
765. Laporan Polisi Militer yang Ketiga: *Laporan-Khusus tentang Hasil Penyelidikan terhadap Petugas PHH pada Demonstrasi tanggal 12 Nopember 1991*, Nomor Lapsus/03/XII/1991, Januari 1992, oleh Polisi Militer Daerah Militer IX, Udayana, Detasemen IX/4. h. 4
766. Ibid, h. 4-5
767. Catatan Kejadian Perkara, 14 November 1991, Berkas Perkara dalam perkara atas Aloysius Rani.

768. Laporan Ndiaye, para. 47.
769. Berita Acara Persidangan No.15/Pid/B/1992/PN.DIL, 7 Mei 1992, p.100.
770. Berita Acara Pemeriksaan pertama dengan Letnan Dua Mursanib**
771. Berita Acara Pemeriksaan ketiga dengan Letnan Dua Mursanib, 21 Maret 1992, jawaban atas pertanyaan q.6b5. BAP ini terdapat dalam Berkas Penyelidikan Kasus berhubungan dengan Kasus Tertuduh: Sersan Satu Aloysius Rani, Denpasar, No. DPP-10/A-09/Komando Daerah Polisi Militer IX/1992, April 1992.
772. Menurut *Asia Watch* dalam *East Timor: The Massacre Courts Martial*, hal. 4, Mursanib merupakan kepala seksi sosial dan politik Kodim (Kasi Sospol).
773. Laporan Ndiaye, para. 29.
774. Laporan Ndiaye, para. 57(d).
775. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 Tahun 1991 tanggal 18 November 1991 tentang Pembentukan Komisi Penyelidik Nasional Peristiwa/Insiden 12 November 1991 di Timor Timur.
776. Amnesty International, *Indonesia/East Timor – Santa Cruz: The Government Response*, AI Index: ASA 21/03/92, Februari 1992, Bab 2.2.
777. Laporan Awal Komisi Penyelidik Nasional ke dalam Insiden 12 November 1991, 26 Desember 1991, Jakarta, (Advance Report of the National Commission of Inquiry into 12 November 1991 Incident in Dili, 26 Desember 1991, Jakarta) dimasukkan sebagai lampiran dalam Laporan Ndiaye.
778. Laporan Ndiaye.
779. Amnesty International, *Indonesia/East Timor – Santa Cruz: The Government Response*, AI Index: ASA 21/03/92, Februari 1992, Bab 2.2.
780. Laporan Awal Komisi Penyelidik Nasional ke dalam Insiden 12 November 1991, 26 Desember 1991, Jakarta (Advance Report of the National Commission of Inquiry into 12 November 1991 Incident in Dili, 26 Desember 1991, Jakarta). dimasukkan sebagai lampiran dalam Laporan Ndiaye
781. Amnesty International, *Indonesia/East Timor – Santa Cruz: The Government Response*, AI Index: ASA 21/03/92, Februari 1992.
782. Laporan Ndiaye, para.79.
783. *Asia Watch, The Massacre Courts-Martial*, 23 Juni 1992, Vol. 4, Nomor 16, hal. 2.
784. Surat bertanggal 27 Februari 1992 dari Perwakilan Tetap Indonesia di PBB kepada Ketua Komisi Hak-hak Asasi Manusia, lihat UN Doc. E/CN.4/1992/79.
785. Laporan Ndiaye, para.35.
786. Appendix 3: Officers Disciplined After the Santa Cruz Massacre, in *Asia Watch, Remembering History in East Timor: The Trial Of Xanana Gusmão and A Follow-Up to the Dili Massacre* (Mengingat Sejarah di Timor-Timur: Pengadilan terhadap Xanana Gusmão dan Tindak Lanjut setelah Pembantaian Dili), Vol.5, No.8, April 1993.
787. *Asia Watch, The Massacre Courts-Martial*, hal. 6.
788. Ibid.
789. Laporan Ndiaye, para.70(g).
790. *Asia Watch, The Massacre Courts-Martial*, hal. 1.
791. *Asia Watch, East Timor: The Courts-Martial*, 23 Juni 1992, Vol. 4, No. 16; *Remembering History in East Timor: The Trial Of Xanana Gusmão and a Follow-Up to the Dili Massacre*, Vol.5, no.8, April 1993.
792. Laporan Polisi Militer yang Kedua, hal. 6.
793. Berita Acara Pemeriksaan terhadap Aloysius Rani, hal.2-4, dalam lampiran Laporan Militer yang Kedua.
794. Ibid. para. 60.
795. Laporan Ndiaye, para.70.
796. Amnesty International, *Indonesia and East Timor: Twenty years of violations: statement before the United Nations Special Committee on Decolonization*, 1995, hal. 7.
797. Pernyataan HRVD 2994.
798. CAVR, Wawancara dengan Jacinta Alves Correia, Gariana (Maubara, Liquiça), 19 Juni 2004; Pernyataan HRVD 2994; 3004.
799. Pernyataan HRVD 2994.
800. CAVR, Wawancara dengan Clementino Amaral, Dili, 11 Juni 2004.

801. CAVR, Wawancara dengan Pastor Rui Gomes, Baucau, 28 Mei 2004.
802. ETISC (East Timor International Support Centre), *From the road to Dili to the Shootings in Baucau*, 1 Juli 1998.
803. CAVR, Wawancara dengan Pastor Rui Gomes, Baucau, 28 Mei 2004.
804. Lihat "Indonesian army apologizes for Timorese death; East Timorese protest against death of youth, Dili, East Timor", *Reuters*, 17 Juni 1998, (Tentara Indonesia meminta maaf atas kematian warga Timor; Warga Timor Timur memprotes kematian pemuda); lihat juga "A Legacy of Bitterness", *Asiaweek*, 8 Agustus 1998.
805. Pernyataan oleh Constancio Pinto di hadapan Komite Dekolonisasi PBB mewakili National Resistance of East Timorese Students (RENETIL), New York, Juli 1998; United Nations A/AC.109/2111/Add.1 General Assembly, 30 Juni 1998, Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, East Timor Working Paper disiapkan oleh Sekretariat.
806. Amnesty International release, AI Index; ASA 21/108/98; Laporan ETHRC (East Timor Human Rights Centre), 28 Februari 1999, hal. 166.
807. Pernyataan HRVD 3461.
808. Pernyataan HRVD 1507; Pernyataan HRVD 1521,; Pernyataan HRVD 1545; Pernyataan HRVD 9019.
809. Pernyataan HRVD 1558; 1603; 3402; 1583; CAVR, Wawancara dengan Anibal Franca da Costa Manufahi, [tidak bertanggal]
810. Pernyataan HRVD 3402.
811. Pernyataan HRVD 1558; 1603; 3402; 1583.
812. Pernyataan HRVD 1531.
813. Pernyataan HRVD 1522.
814. Pernyataan HRVD 4042
815. Pernyataan HRVD 4061.
816. Pernyataan HRVD 1572; 3467; 4042.
817. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, p. 181
818. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal 202.
819. Pernyataan HRVD 1197; 1115; 1156; 1140; 4317; 1116.
820. Pernyataan HRVD 8161.
821. Pernyataan HRVD 7820; 7051.
822. Pernyataan HRVD 8167.
823. Pernyataan HRVD 6177.
824. Pernyataan HRVD 8161.
825. Pernyataan HRVD 2912.
826. Pernyataan HRVD 2641.
827. Pernyataan HRVD 3476.
828. Lihat CAVR, Wawancara dengan Agostinho Boavida Ximenes (Sera Malik), 28 Agustus 2004, Soe, (Timor Barat, Indonesia).
829. Pernyataan HRVD 7758.
830. Pernyataan HRVD 5043.
831. Pernyataan HRVD 8916.
832. Pernyataan HRVD 7280.
833. Pernyataan HRVD 4033.
834. Pertanyaan HRVD 5278.
835. Pernyataan HRVD 9020 dan 4883.
836. Pernyataan HRVD 6622, CAVR, Wawancara dengan Martinho de Jesus, Matorek, Manufahi, 6 Juni 2003; Lihat juga Pernyataan HRVD 4041, 9043.
837. Pernyataan HRVD 7078.
838. Pernyataan HRVD 5335.
839. Pernyataan HRVD 0638.
840. CAVR, Wawancara dengan Aleixo Rogerio José, Lugasa, Viqueque, 14 Desember 2003,

841. Wawancara Anthony Goldstone dengan Jacobs, tertanggal 4 Agustus 1982, submisi kepada CAVR, Arsip CAVR.
842. Pernyataan HRVD 8028; lihat juga Pernyataan 8030.
843. Pernyataan HRVD 0522.
844. Pernyataan HRVD 1570.
845. Pernyataan HRVD 2299; lihat juga Pernyataan HRVD 2296 dan Pernyataan 1620 (yang secara tidak benar melaporkan serangan pada tahun 1983); CAVR, Wawancara dengan Anselmo Fernandes Xavier dan Edmundo da Cruz, Com, Lautém, 10 Oktober 2003.
846. Pernyataan HRVD 5371.
847. Pernyataan HRVD 7840, 8719, 6515.
848. Lihat Pernyataan 7340 (membunuh seorang lelaki bernama Cosme di Bahatata, Uatu-Carbau, Viqueque); Pernyataan 7776 (pembunuhan seorang kepala desa bernama Eugenio di Maluro, Quelicai, Baucau), Pernyataan 7615 (pembunuhan seorang anggota Hansip Sico Hornay dan seorang perempuan bernama Joanna di Home, Lautém), dan Pernyataan 9032 (pembunuhan dua orang Hansip, dalam sebuah operasi militer).
849. Fretilin/Conselho Revolucionario de Resistencia Nacional (Revolutionary Council of National Resistance, CRRN), Mensagem de Saudação, Lisbon 1985.
850. Pernyataan HRVD 2719.
851. Pernyataan HRVD 4767.
852. Pernyataan HRVD 1931 (di Manatuto) dan Pernyataan 4439 (di Lautém).
853. Pernyataan HRVD 0425.
854. Ernest Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, hal. x, dan Pernyataan HRVD 3945 dan Pernyataan 4008.
855. Pernyataan HRVD 9198 (Iliomar, Lautém), Pernyataan 4154 (Bibileo, Viqueque), Pernyataan 3822 (Vemasse, Baucau) dan Pernyataan-pernyataan 9002, 9015, 9019 dan 6022 (Taitudak, Manatuto), dan Pernyataan 5810 (Faturasa, Aileu).
856. Pernyataan HRVD 1931.
857. Pernyataan HRVD 3197.
858. Pernyataan HRVD 3420.
859. Pernyataan HRVD 6483.
860. Pernyataan HRVD 2301; Lihat juga "Soal Tewasnya Dua Guru di Timtim, Dunia Pendidikan Sesalkan Tindakan Brutal," *Republika*, 7 Juni 1997, dan Human Rights Watch.
861. Pernyataan HRVD 7783.
862. Lihat Pernyataan HRVD 5766, Pernyataan 5078, dan Pernyataan 5074 untuk informasi tentang penangkapan-penangkapan menyusul serangan tersebut.
863. Pernyataan HRVD 3179.
864. Pernyataan-pernyataan HRVD 4231, 1116, dan 5535; dan CAVR, Wawancara dengan Rosana Barros, Bendito Gomes Aldeia dan Iria Paula (semuanya berlangsung di Cailaco, Bobonaro, 14 Juni 2004) dan Adriano João, Dili, 21 September 2004.
865. Pernyataan HRVD 3813.
866. Pernyataan HRVD 5626.
867. Contoh-contohnya antara lain seperti yang disebut dalam Pernyataan HRVD 8259, 8244 dan 3530 (semuanya di Ermera).
868. Pernyataan 0710.
869. Juga dilaporkan oleh Amnesty International ASA 21/49/99, 21 Juni 1999.
870. Ibid.
871. Pernyataan HRVD 6740.
872. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Kol. Herman Sedyoso, et al., Perkara No. 14/2003, paragraf 215-225.
873. Ibid, paragraf 226-230.
874. Ibid., para. 231-236.
875. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal.192

876. Jaksa Penuntut Umum dari UNTAET, Pendakwaan terhadap Leoneto Martins, et al., Perkara No. 21/2001, paragraf 85-95.
877. Pernyataan HRVD 0082; 1823; 1963; 4644; 4669; 5876; 9191; 0276; 2326; 4614; 5860; 5944; 0196
878. Herminia Mendes, Kesaksian disampaikan kepada Audiensi Publik CAVR tentang Pembantaian, 19-21 November 2003.
879. Deposisi Pastor Rafael dos Santos, direkam dan dikumpulkan di Sydney, Australia pada tanggal 27-28 Oktober, 1999, hal. 8., dikutip dalam Submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 194.
880. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 192-196
881. Pernyataan HRVD 0082
882. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 195.
883. Mengenai ketiga pembunuhan berikut, Jaksa Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Leoneto Martins, et al., Perkara No. 21/2001, paragraf 80-84, 126, 129-132.
884. Pernyataan HRVD 0196.
885. Pernyataan HRVD 2983.
886. Pernyataan HRVD 1001.
887. Jaksa Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Leoneto Martins, et al., Perkara No. 21/2001, paragraf 133-136.
888. Pernyataan HRVD 4701.
889. Herminia Mendes, Kesaksian disampaikan pada Audiensi Publik CAVR tentang Pembantaian, 19-21 November 2003.
890. Pernyataan HRVD 4231.
891. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal 198
892. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Burhanuddin Siagian, et al., Perkara No. 02/2002, paragraf 51.
893. Ibid, paragraf 84-101; Wawancara CAVR dengan Bendito Gomes Aldeia, Marco, Cailaco, (Bobonaro), 14 Juni 2004
894. Wawancara CAVR dengan Rosana Barros, Marco, Cailaco, (Bobonaro), 14 Juni 2004
895. Pernyataan HRVD 5532; wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 21 September 2004
896. Wawancara CAVR dengan Iria Paula, Purogoa, Meligo (Cailaco, Bobonaro) 14 Juni 2004
897. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 197-200
898. Berhubungan dengan penangkapan Aprigio Mali Tae dan Carlos (Sama-Lelo), dan eksekusi Cornelio Rosa (sic) da Silva, Antonio Basilio dan Armando (Berlaku) lihat Wawancara CAVR dengan Bendito Gomes, Aldeia, Marco, Cailaco (Bobonaro), 14 Juni 2004; berhubungan dengan eksekusi Aprigio Mali Tae dan Carlos Sama-Lelo, lihat Adriano João, "Kasus eksekusi 12-04-99 di Cailaco", manuskrip tak tertibkan, 10 Juni 2004, (Arsip CAVR), dan Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Burhanuddin Siagian, et al., Perkara No. 2002/02, paragraf 121-126; berhubungan dengan eksekusi Armando Berlaku lihat Pernyataan HRVD 2544; berhubungan dengan eksekusi José Barros dan Cornelio Rodrigues da Silva, lihat penyaksian mata yang diberi oleh istrinya Cornelio di Pernyataan HRVD 5507.
899. Wawancara CAVR dengan Bendito Gomes, Marco, Cailaco, 14 Juni 2004; Adriano João, "Kasus eksekusi 12-04-99 di Cailaco", manuskrip tak tertibkan, 10 Juni 2004, (Arsip CAVR)
900. Pernyataan HRVD 5639-02; 6749; 6680; 6687.
901. CAVR Laporan Perjalanan (sic) Tim Peneliti Survei Batu Nisan RMS Lebocoe (Maubara, Liquiça), 21 Oktober 2003; Pernyataan HRVD 4661; 6940
902. Dikuatkan oleh Menteri Luar Negeri Irlandia David Andrews dan Basilio Araújo yang hadir ketika pembicaraan ini terjadi.
903. Pernyataan 05732. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Eurico Guterres, et al., Perkara No. 2/2002, paragraf 26.
904. Pernyataan HRVD 0116; 0159. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Eurico Guterres, et al., Perkara No. 2/2002, paragraf 14-20
905. Pernyataan HRVD 0135. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Mateus de Carvalho, et al., Perkara No. 24/2003, paragraf 34-39.
906. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Mateus de Carvalho, et al., Perkara No. 24/2003, paragraf 40-49.

907. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Kol. Herman Sedyoso, et. al., Perkara No. 14/2003, paragraf 180.
908. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Cancio Lopes de Carvalho, et al., Perkara No. 6/2003, paragraf 29-60.
909. Ibid, paragraf 61-73.
910. Pernyataan HRVD 3655.
911. Pernyataan HRVD 5206.
912. Pernyataan 8423. Lihat juga Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Kol. Herman Sedyoso, et. al., Perkara No. 14/2003, paragraf 167.
913. Pernyataan HRVD 6258.
914. Pernyataan HRVD 8544. Lihat juga Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Kol. Herman Sedyoso, et. al., Perkara No. 14/2003, paragraf 195.
915. Lihat juga Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Kol. Herman Sedyoso, et. al., Perkara No. 14/2003, paragraf 201.
916. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Kol. Herman Sedyoso, et. al., Perkara No. 14/2003, para. 204.
917. Wakil jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Egidio Manek et al., Perkara No. 09/2003, paragraf 131.
918. Pernyataan HRVD 8578; 8414; 8595.
919. Pernyataan HRVD 9031.
920. Pernyataan HRVD 4585.
921. Pernyataan HRVD 9031.
922. Pernyataan HRVD 2530.
923. Pernyataan HRVD 4597.
924. Pernyataan HRVD 9471.
925. Pernyataan HRVD 4598.
926. Pernyataan HRVD 3557; 3573.
927. Pernyataan HRVD 5485. Jaksa Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Bernadino da Costa, Perkara No. 03/2002, paragraf 30-36.
928. Pernyataan HRVD 5488. Jaksa Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Bernadino da Costa, Perkara No. 03/2002, paragraf 24-29.
929. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Nazario Vital dos Santos Corte Real, et al., Perkara No. 13/2004, paragraf 28-31.
930. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 155.
931. Pernyataan HRVD 8104; 0135 (pembunuhan oleh milisi Aitarak di Metinaro pada bulan April); 0159 (João Bosco, Luis Diaz hilang di Hera); 3757 (Luis Diaz di Hera); 0116 (Luis Diaz di Hera); 3886; 8068 dan 8104.
932. Pernyataan HRVD 3655
933. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 206-207; Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Mateus de Carvalho, et al., Perkara No. 24/2003, paragraf 50-56.
934. Jaksa Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Armando dos Santos, Perkara No. 16/2001, paragraf 13-16.
935. Pernyataan HRVD 4678.
936. Pernyataan HRVD 7825
937. Pernyataan HRVD 3883-03
938. Pernyataan HRVD 6493; 6496.
939. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 162; Pernyataan HRVD 8385; 8296; 8295; 3510; 1705.
940. Pernyataan HRVD 3886; 8068. Korban juga disebut dengan nama lain Eugenio Fatima.
941. Pernyataan HRVD 8104.
942. Pernyataan HRVD 2163, 2502, 2503, 2522, 2558, 3551.

943. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal.172.
944. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 166, mengutip putusan Pengadilan Negeri Dili, Joni Marques, et. al., dalam para. 53-57; 08739
945. Pernyataan HRVD 0404; 0467; 0469; 0470; 0471; 0475; 0477
946. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan Maliana, Perkara No. 18/2003. Pernyataan HRVD 6756; 6760.
947. Pernyataan HRVD 4645.
948. Pernyataan HRVD 1831.
949. Pernyataan HRVD 0290.
950. Pernyataan HRVD 2700 ; Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Cancio Lopes de Carvalho dkk, Perkara No. 06/2003; Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 136
951. Pernyataan HRVD 2677.
952. Pernyataan HRVD 6132.
953. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Richard Hutadjulu dkk, Perkara No. 33/2003.
954. Pusat HAM Timor Timur (East Timor Human Rights Centre, Melbourne, Australia) SR1/99.
955. Pernyataan HRVD 3779. Pusat HAM Timor Timur, SR 1/99.
956. Pernyataan HRVD 6418.
957. Pernyataan HRVD 6429 dan 6436. Jaksa Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Sergio da Costa, Perkara No. 2001/12.
958. Pernyataan HRVD 6421.
959. Pernyataan HRVD 6360.
960. Pernyataan HRVD 4520.
961. Pernyataan HRVD 6211.
962. Pernyataan HRVD 6209.
963. Pernyataan HRVD 1021.
964. Pernyataan HRVD 5323.
965. Jaksa Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Joni Marques, et al., Perkara No. 9/2000, para. 18-20. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, Putusan, 11 Desember 2001. Pernyataan HRVD 8739.
966. SR 1/99.
967. Pernyataan HRVD 2661.
968. Jaksa Penuntut Umum, Pendakwaan terhadap Vidal Doutel Sarmento, et al., Perkara No. 11/2002, para. 22-25.
969. Pernyataan HRVD 0643.
970. Pernyataan HRVD 1312. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Nazario Vital dos Santos Corte Real, et al., Perkara No. 13/2004, paragraf 35-42.
971. Pernyataan HRVD 1603.
972. Pernyataan HRVD 1512.
973. Pernyataan HRVD 9045.
974. Pernyataan HRVD 6899.
975. Pernyataan HRVD 0404; 0467; 0469; 0470.; 0475.
976. Pernyataan HRVD 0479.
977. Pernyataan HRVD 1872.
978. Pernyataan HRVD 1169.
979. Pernyataan HRVD 8219.
980. Wakil Jaksa Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Pendakwaan Maliana, Perkara No. 18/2003. Pernyataan HRVD 0241.
981. Pernyataan HRVD 8204.
982. Pernyataan HRVD 5743.
983. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 156.

984. Ibid., hal. 156.
985. Pernyataan HRVD 5096.
986. Pernyataan HRVD 8943; 8946; 8951; 2947; 8943.
987. Pernyataan HRVD 0374; 0876.
988. Pernyataan HRVD 0850 ; 00876 (Inacio Haumetan dibunuh, satu lagi percobaan pembunuhan); 2632 (Hendrikus Oki dibunuh oleh BMP, Aitarak, TNI dan polisi); 2857 (Henrik Oki oleh BMP)
989. Pernyataan HRVD 6896; 6901; 8940 – Saturlino dan Tomás Nino
990. Pernyataan HRVD 6211; 6377
991. Pernyataan HRVD 6209.
992. Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Leoneto Martins, et al., Perkara No. 21/2001, paragraf 141-147; Pernyataan HRVD 2985.
993. Pernyataan HRVD 1997.
994. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 189-190; Pernyataan HRVD 4127
995. CAVR, wawancara dengan Helena de Araújo, Dili, 17 September 2003.
996. Tim Penelitian CAVR Laporan penelitian CAVR mengenai penembakan terhadap Kuluhun tertanggal 26 Agustus 1999. Arsip CAVR
997. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Kol. Herman Sedyoso, et. al., Perkara No. 14/2003 para. 237-253.
998. Penuntut Umum Republik Demokratik Timor-Leste, Pendakwaan terhadap Edmundo da Conceição da Silva, et al., Perkara No. 12a/2002 para 21-45.
999. Pernyataan HRVD 0923.
1000. Pernyataan HRVD 2434 ; 2451 (Raoul dos Santos, Paulino); 2462 (Jaime, Felis Laku)
1001. Pernyataan HRVD 2451.
1002. Pernyataan HRVD 2917; lihat juga 2919 dan 2943.
1003. Pernyataan HRVD 2615; 2616 2617; 2619; 2625; 2634; 2635.
1004. Pernyataan HRVD 5463, 5464. Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Bernadino da Costa, Perkara No. 3/2002, paragraf 40-44.
1005. Pernyataan HRVD 4578; 6448.
1006. Pernyataan HRVD (Manuel Oliveira) – 2160; 2163; 2509; 4553.
1007. Pernyataan HRVD 6200.
1008. Pernyataan HRVD 4545; 4562; 6201.
1009. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan Maliana, Perkara No. 18/2003.
1010. Pernyataan HRVD 2221.
1011. Pernyataan HRVD 8335.
1012. Amnesty International, "Timor-Leste: Korban kejahatan terhadap kemanusiaan tetap menunggu keadilan", 29 Agustus 2003, dengan tambahan pada 8 Januari 2004, <http://web.amnesty.org/pages/tmp-290803-background-eng> pada tanggal 18 Juli 2005
1013. Pernyataan HRVD 9471.
1014. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 217, n. 68
1015. Ibid, h. 221-224; Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Eurico Guterres, et. al., Perkara No. 13/2003, paragraf 27-77. Pernyataan HRVD 5664 (penghilangan dari kediaman Uskup - Vicente da Costa Carlos Tilman); 5678 (penghilangan dari Bidau Santa Ana setelah dipindahkan dari kediaman Uskup setelah penyerangan)
1016. Pernyataan HRVD 05664.
1017. Pernyataan HRVD 05734 dan 05678.
1018. Pernyataan HRVD 06351 (penyerangan terhadap Aidila memaksa para pengungsi untuk mencari perlindungan di gereja pada 6 September)
1019. Pernyataan HRVD 7219 ; 7276 ; 8435.
1020. Pernyataan HRVD 07390; 08345; 09009.
1021. Pernyataan HRVD 6351.
1022. Pernyataan HRVD 1266.

1023. 1023 Pernyataan HRVD 7219.
1024. Fokupers, Pelanggaran berdasarkan gender dalam tahun 1999. Submisi ke CAVR, Juli 2004; Pernyataan HVRD F9323
1025. Feliciano Cardoso, Pernyataan disiapkan oleh CAVR menurut Wawancara dengan Feliciano Cardoso, 12 April 2003, untuk CAVR Audiensi Publik Perempuan dan Konflik, 28-29 April 2003.
1026. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, h. 237-239.
1027. Pernyataan HRVD 5965; Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, h. 135.
1028. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan Maliana, Perkara No. 18/2003, paragraf 128-190.
1029. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, h. 233; wawancara CAVR dengan Domingas Verdial, Mugis, Maliana, 15 Juni 2004
1030. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan Maliana, Perkara No. 18/2003, paragraf 191-220.
1031. Pernyataan HRVD 2587; Wawancara CAVR dengan Adriano João, Kantor CAVR, Dili, 21 September 2004
1032. Wawancara CAVR dengan Domingas Verdial, Mugis, Maliana, 15 Juni 2004.
1033. Wawancara CAVR dengan Adelino G. Brito, 15/6/2004.
1034. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal.158.
1035. Penuntut Umum Republica Democratica Timor-Leste, Pendakwaan terhadap Mayor Jacob Djoko Sarosa dan Letnan Camilo dos Santos. Perkara No. 10/2002, paragraf 54-57
1036. Ibid, paragraf 62-86
1037. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 242
1038. Penuntut Umum Republica Democratica Timor-Leste, Pendakwaan terhadap Mayor Jacob Djoko Sarosa dan Letnan Camilo dos Santos. Perkara No. 10/2002 Pendakwaan Perkara No., paragraf 95-107.
1039. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal.243
1040. Ibid, hal 244
1041. Pernyataan HRVD 2675; 2718; 5005; Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat Pendakwaan terhadap Cancio Lopes de Carvalho, et al., Perkara No. 06/20003, paragraf 36-58; F. Rawski, "Truth-Seeking and Local Histories in East Timor", *Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law* 1:77-96, 2002.
1042. Pernyataan HRVD 2675, 2718, 5005.
1043. Fokupers, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, Pernyataan 99AIN007.
1044. Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Simão Lopes, et al., Perkara No. 20/2001, paragraf 56-63.
1045. Pernyataan HRVD 2832; 2836.
1046. Pernyataan HRVD 2804.
1047. Pernyataan HRVD 2828.
1048. Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Simao Lopes, et al., Perkara No. 20/2001.
1049. Pernyataan HRVD 2804; 2806; 2832; 2814; 2819 ; 2837; 6895; 6893; 6901; 6910.
1050. Pernyataan HRVD 6893.
1051. Pernyataan HRVD 2837.
1052. Pernyataan HRVD 0372; 0375; 0377; 0811; 0831; 0832; 0833; 0834; 0838; 0839; 0840; 0865; 0869; 2972 dan 0384; Jaksa Agung RDTL, Pendakwaan terhadap Laurentino Soares (alias Moko) dan Bonifacio Bobo (alias Bone), Perkara No. 13/2002 (OE-4-99-SC), paragraf 17-22.
1053. Untuk pembunuhan lain pada 20 Oktober, lihat juga Pernyataan HVRD : 0368; 0371; 0377; 0384; 0389; 0841; 0865; 0870; 8952.
1054. Pernyataan HRVD 0377 – Pernyataan dari Matias Slaen
1055. Pernyataan HRVD 6270; Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan Terhadap Egidio Manek, et al., Perkara No. 09/2003, paragraf 302-316.
1056. Pernyataan HRVD 6940, 8981; 8993.

1057. Fokupers, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, Pernyataan HVRD F9367
1058. Sugeng Prayudi, Winston Rondo dan Matheus Krivo, "Not Eno: Program Dokumentasi Penyebaran Informasi kepada CAVR oleh Koalisi LSM Timor Barat", submisi Koalisi LSM Timor Barat kepada CAVR, Juni 2003, h. 29.
1059. "Upaya Penuntasan Penyelesaiannya Penanganan Pengungsi Eks Timor Timur (sejak tahun 1999 s/d 2003)", dokumen Satkorlak PBP NTT, Kupang, 2003.
1060. Dolan, C., Large, J. and Obi, N., *Evaluation of UNHCR's Repatriation and Reintegration Programme in East Timor, 1999-2003*, Jenewa: UNHCR, Evaluation and Policy Analysis Unit, February 2004, p. 12
1061. Pernyataan HVRD 3513.
1062. Pernyataan HVRD 5675.
1063. Pernyataan HVRD 5188.
1064. Pernyataan HVRD 8095.
1065. Jaksa Penuntut Umum dari UNTAET, Pendakwaan terhadap Anastacio Martins dan Domingos Gonçalves, Perkara No. 11/2001, paragraf 46-52.
1066. Pernyataan HVRD 8335.
1067. Pernyataan HVRD 4836.
1068. Pernyataan HVRD 5718.
1069. Pernyataan HVRD 7153.
1070. Pernyataan HVRD 7155.
1071. Pernyataan HVRD 2588.
1072. Pernyataan HVRD 3706.
1073. Pernyataan HVRD 2645.
1074. Pernyataan HVRD 2820; 2880.
1075. Pernyataan HVRD 2825.
1076. Pernyataan HVRD 2887.
1077. Pernyataan HVRD 4835.
1078. Pernyataan HVRD 4907.
1079. Pernyataan HVRD 3266; 3269; 4839. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Domingos Alberto Carlos, Carlos Jose dan Almeida Martins (atas nama Almeida Soares), Perkara No. 20/2003, paragraf 17-41.
1080. Pernyataan HVRD 3269.
1081. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Gaspar Leite, Perkara No. 05/2001.
1082. Pernyataan HVRD 3230.
1083. Pernyataan HVRD 3227.
1084. Pernyataan HVRD 3580.
1085. Pernyataan HVRD 3229.
1086. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Adolf Amaral, Perkara No. 35/2003.
1087. Pernyataan HVRD 2089.
1088. Pernyataan HVRD 5789.
1089. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Anigio de Oliveira, Perkara No. 07/2001.
1090. Pernyataan HRVD 2008; 2676
1091. Pernyataan HRVD 7408
1092. Pernyataan HVRD 1312.
1093. Pernyataan HVRD 1308; 1329; 1373; 1375.
1094. Pernyataan HVRD 1353.
1095. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Richard Hutadjulu dan para pelaku lain, Perkara No. 33/2003.
1096. Pernyataan HVRD 7089.
1097. Pernyataan HVRD 2362. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap

- Richard Hutadjulu dan para pelaku lain, Perkara No. 33/2003.
1098. Wakil Ketua Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Richard Hutadjulu dan para pelaku lain, Perkara No. 33/2003. Lihat juga Pernyataan HVRD 2362; 0563.
1099. Pernyataan HVRD 2329.
1100. Pernyataan HVRD 2335.
1101. Pernyataan HVRD 4248.
1102. Pernyataan HVRD 4254.
1103. Pernyataan HVRD 8947.
1104. Pernyataan HVRD 8633, 8806.
1105. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Francisco dos Santos Laku, Armindo dos Santos dan Mário de Carvalho, Perkara No. 08/2001.
1106. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Francisco Pedro alias Geger, Perkara No. 01/2001. Lihat juga Pernyataan HRVD 06873.
1107. Pernyataan HVRD 8145.
1108. Wakil Ketua Jaksa Penuntut Umum for UNMISSET, Pendakwaan terhadap Paulino de Jesus, Perkara No. 06/2002.
1109. Pernyataan HVRD 8230.
1110. Pernyataan HVRD 8230.
1111. Pernyataan HVRD 6759; 8224.
1112. Pernyataan HVRD 6727.
1113. Pernyataan HVRD 6745.
1114. Pernyataan HVRD 6747.
1115. Pernyataan HVRD 4491.
1116. Pernyataan HVRD 6743
1117. Pernyataan HVRD 5541.
1118. Pernyataan HVRD 2545.
1119. Pernyataan HVRD 4297.
1120. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Penuntutan Lolotoe, Perkara No. 04/2001; Pernyataan HVRD 5541.
1121. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Penuntutan Lolotoe, Perkara No. 04/2001. Pernyataan HRVD 5538; 5545.
1122. Wakil Jaksa Penuntut untuk Kejahatan Berat, Penuntutan Maliana, Perkara No. 18/2003.
1123. Pernyataan HVRD 2405; 2584; 2590.
1124. Wakil Jaksa Penuntut untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Augusto Asameta Tavares, Perkara No. 02/2001
1125. Pernyataan HVRD 8810.
1126. Pernyataan HVRD 1153.
1127. Pernyataan HVRD 2582.
1128. Wakil Ketua Jaksa Penuntut untuk Kejahatan Berat, Penuntutan Maliana , Perkara No. 18/2003. Pernyataan HVRD 2595.
1129. Pernyataan HVRD 2430.
1130. Wakil Ketua Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Penuntutan Maliana , Perkara No. 18/2003, paragraf 234-246.
1131. Pernyataan HVRD 5519.
1132. Jaksa Penuntut Umum untuk UNTAET, Pendakwaan terhadap Manuel Gonsales Bere, Perkara No. 10/2000.
1133. Wakil Ketua Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Egidio Manek, et al., Perkara No. 9/2003, paragraf 199-206.
1134. Wakil Ketua Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Egidio Manek, et al., Perkara No. 9/2003, paragraf 242-254.
1135. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Kol Herman Sedyoso, et al., Perkara No. 14/2003, paragraf 364-367.

1136. Pernyataan HVRD 5113.
1137. Pernyataan HVRD 3673.
1138. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Egidio Manek, et al., Perkara No. 9/2003, paragraf 265-279.
1139. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Kol Herman Sedyono, et al., Perkara No. 14/2003, paragraf 361-363.
1140. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Egidio Manek, et al., Perkara No. 9/2003, paragraf 295-301.
1141. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Kol Herman Sedyono, et al., Perkara No. 14/2003, paragraf 354-360.
1142. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Herman Sedyono, et al., Perkara No. 14/2003, paragraf 368-371. Pernyataan HRVD 8440.
1143. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Herman Sedyono, et al., Perkara No. 14/2003, paragraf 372-377.
1144. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Egidio Manek, Perkara No. 9/2003, paragraf 340-343.
1145. Pernyataan HVRD 8435.
1146. Pernyataan HVRD 7219.
1147. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Joanico Gusmão, Perkara No. 7/2003, paragraf 15-22.
1148. Pernyataan HVRD 2049.
1149. Pernyataan HVRD 8958.
1150. Pernyataan HVRD 8439.
1151. Pernyataan HVRD 7386.
1152. Pernyataan HVRD 6345.
1153. Pernyataan HVRD 8424.
1154. Pernyataan HVRD 7247.
1155. Pernyataan HVRD 7396.
1156. Pernyataan HVRD 3653.
1157. Pernyataan HVRD 6261.
1158. Pernyataan HVRD 8593.
1159. Pernyataan HVRD 3672.
1160. Pernyataan HVRD 3628.
1161. Pernyataan HVRD 8525.
1162. Wakil Ketua Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Egidio Manek, et al., Perkara No. 9/2003, paragraf. 317-324.
1163. Wakil Ketua Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Kol Herman Sedyono, et al., Perkara No. 14/2003, paragraf 424-428.
1164. Wakil Ketua Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Egidio Manek, et al., Perkara No. 9/2003, paragraf 337-339.
1165. Wakil Ketua Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Kol Herman Sedyono, et al., Perkara No. 14/2003, paragraf 378-386.
1166. Ibid., para. 344.
1167. Wakil Ketua Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Kol Herman Sedyono, et al., Perkara No. 14/2003, paragraf 417-421.
1168. Pernyataan HVRD 2040.
1169. Pernyataan HVRD 5046. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Beny Ludji dan José Pereira, Perkara No. 16/2003.
1170. Pernyataan HVRD 5084.
1171. Pernyataan HVRD 7024.
1172. Pernyataan HVRD 5755.
1173. Pernyataan HVRD 5060.

1174. Pernyataan HVRD 0197.
1175. Pernyataan HVRD 2433; 3711.
1176. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Mateus de Carvalho, et. al., Perkara No. 24/2003, paragraf 57-61.
1177. Pernyataan HVRD 5054.
1178. Pernyataan HVRD 5053.
1179. Pernyataan HVRD 5775.
1180. Pernyataan HVRD 8048.
1181. Pernyataan HVRD 6933.
1182. Pernyataan HVRD 6932.
1183. Wakil Ketua Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Mateus de Carvalho, et. al., Perkara No. 24/2003, paragraf 66-70.
1184. Pernyataan HVRD 0103.
1185. Wakil Ketua Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Mateus de Carvalho, et. al., Perkara No. 24/2003, paragraf 71-75.
1186. Jaksa Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Agustino da Costa, Perkara No. 7/2000.
1187. Pernyataan HVRD 4467.
1188. Pernyataan HVRD 6159.
1189. Pernyataan HVRD 6363.
1190. Pernyataan HVRD 8335.
1191. Pernyataan HVRD 1057.
1192. Pernyataan HVRD 3536.
1193. Pernyataan HVRD 7626.
1194. Pernyataan HVRD 7620.
1195. Pernyataan HVRD 7622.
1196. Pernyataan HVRD 8752.
1197. Pernyataan HVRD 8742. Jaksa Penuntut Umum RDTL, Pendakwaan terhadap Mayor Jacob Djoko Sarosa dan Letnan Camilo dos Santos, Perkara No. 10/2002, paragraf 44-49.
1198. Jaksa Penuntut Umum Timor-Leste, Pendakwaan terhadap Mayor Jacob Djoko Sarosa dan Letnan Camilo dos Santos, Perkara No. 2002/10, paragraf 15-34.
1199. Pernyataan HVRD 8734.
1200. Pernyataan HVRD 8734; 8743.
1201. Pernyataan HVRD 8747.
1202. Pernyataan HVRD 8738.
1203. Pernyataan HVRD 8743.
1204. Pernyataan HVRD 2255.
1205. Pernyataan HVRD 2147. Jaksa Penuntut Umum RDTL, Pendakwaan terhadap Mayor Jacob Djoko Sarosa dan Letnan Camilo dos Santos, Perkara No. 10/2002, paragraf 57-64.
1206. Pernyataan HVRD 2285. Jaksa Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Joni Marques, et al., Perkara No. 9/2000, para. 29-32. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, Keputusan, 11 Desember 2001.
1207. Pernyataan HVRD 2298.
1208. Pernyataan HVRD 2127. Jaksa Penuntut Umum dari UNTAET, Pendakwaan terhadap José Valente, Perkara No. 3/2001.
1209. Pernyataan HVRD 0249; 0250; 0227; 0228. Jaksa Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Anastacio Martins dan Domingos Gonçalves, Perkara No. 11/2001, paragraf 25-33.
1210. Pernyataan HVRD 6476.
1211. Pernyataan HVRD 6565.
1212. Pernyataan HVRD 06497; 8282.
1213. Pernyataan HVRD 7897.
1214. Pernyataan HVRD 6486.
1215. Pernyataan HVRD 6486. Jaksa Penuntut Umum, Pendakwaan terhadap Vidal Doutel Sarmiento, et

- al., Perkara No. 11/2002, paragraf 80-103.
1216. Pernyataan HVRD 7949; 7533.
1217. Pernyataan HVRD 7902.
1218. Pernyataan HVRD 7903.
1219. Pernyataan HVRD 1912.
1220. Pernyataan HVRD 1371. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Nazario Vital dos Santos Corte Real, et al., Perkara No. 13/2004, paragraf 50-55.
1221. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Nazario Vital dos Santos Corte Real, et al., Perkara No. 13/2004, paragraf 56-59.
1222. Idem, paragraf 60-69.
1223. Idem, paragraf 70-71.
1224. Pernyataan HVRD 5414.
1225. Pernyataan HVRD 5428. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Nazario Vital dos Santos Corte Real, et al., Perkara No. 13/2004, paragraf 72-73.
1226. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Nazario Vital dos Santos Corte Real, et al., Perkara No. 13/2004, paragraf 74-85.
1227. Pernyataan HVRD 4059.
1228. Pernyataan HVRD 4740 ; 5440.
1229. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Nazario Vital dos Santos Corte Real, et al., Perkara No. 13/2004, paragraf 86-87.
1230. Mengenai penyerangan terhadap tiga desa tersebut, lihat Jaksa Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Simão Lopes, et al., Perkara No. 20/2001, paragraf 42-55.
1231. Pernyataan HVRD 2838.
1232. Pernyataan HVRD 2828.
1233. Pernyataan HVRD 2901.
1234. Pernyataan HRVD 2901.
1235. Pernyataan HVRD 2854.
1236. Pernyataan HVRD 2895.
1237. Pernyataan HVRD 6904.
1238. Pernyataan HVRD 2901.
1239. Pernyataan HVRD 2645.
1240. Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Pendakwaan terhadap Jorgé Ulan, et al., Perkara No. 32/2003.
1241. Pernyataan HVRD 2840. Jaksa Penuntut Umum RDTL, Pendakwaan terhadap Umbertus Ena dan Carlos Ena, Perkara No. 5/2002.
1242. Pernyataan HVRD 0857; 0860; 0330.
1243. Pernyataan HVRD 0311; 0383; 0392.
1244. Pernyataan HVRD 0307.
1245. Pernyataan HVRD 0843; 0850.
1246. Pernyataan HVRD 0828; 0818,
1247. Pernyataan HVRD 0829.
1248. Pernyataan HVRD 0357, 0814, 0881.
1249. Pernyataan HVRD 2894, 0871, 2943.
1250. Pernyataan HVRD 2919.
1251. Pernyataan HVRD 2939.
1252. Pernyataan HVRD 0877.
1253. Pernyataan HVRD 2944.
1254. Pernyataan HVRD 0867.
1255. Pernyataan HVRD 0376.
1256. Pernyataan HVRD 8949.
1257. Pernyataan HVRD 2648.

1258. Pernyataan HVRD 355; 0817.
1259. Pernyataan HVRD 0453.
1260. Pernyataan HVRD 0452.
1261. Pernyataan HVRD 0461.
1262. Pernyataan HVRD 0452; 0453; 0461
1263. Pernyataan HVRD 00425; *Tim Relawan Flores untuk Kemanusiaan, Pasukan Sipil Integrasi – Kekerasan dan Pengungsian Warga Timor Leste*, Submisi kepada CAVR Juli 2003, h. 52.



Foto oleh Peter Rodgers

Chega!

Bagian 7
Bab 7.3.

Pemindahan paksa
dan kelaparan

Bagian 7.3. Pemindahan paksa dan kelaparan

1295 | Pendahuluan

1298 | Definisi dan metodologi

1298 | Pemindahan

1300 | Kelaparan

1302 | Mengumpulkan informasi

1303 | Pengungsian dan kelaparan akibat konflik internal (1974-1975)

1303 | Pengungsian akibat persaingan politik (1974-1975)

1305 | Pengungsian yang disebabkan oleh konflik internal

1306 | Pelarian ke Timor Barat

1309 | Pemindahan paksa ke Timor Barat

1310 | Jumlah pengungsi di Timor Barat

1311 | Kondisi dan bantuan kemanusiaan di Timor Barat

1313 | Kekurangan bahan makanan dan bantuan kemanusiaan di Timor-Leste

1313 | Kelaparan dan kematian

1314 | Pemindahan dan kelaparan selama pendudukan Indonesia (1975-1979)

1314 | Invasi, pemindahan, dan evakuasi 1975-1977

1315 | Evakuasi dan pengungsian setelah invasi besar-besaran

1317 | Ditangkap atau menyerah

1317 | Keretakan dalam tubuh Fretilin dan kebijakan mengenai penduduk sipil

1318 | Tanggung jawab pihak-pihak yang berkonflik

1320 | Pengungsian, kelaparan, dan kematian di Bobonaro

1321 | **Boks:** Bobonaro menyerah

1324 | Hidup dan mati di pergunungan (1976-1978)

1325 | Strategi *base de apoio* Fretilin

1325 | **Vemasse (Vemasse, Baucau)**

1326 | **Covalima**

1328 | Kehidupan di *base de apoio*

1329 | Boks: Pandangan seorang perempuan muda mengenai kehidupan di *base de apoio*

1333 | Penahanan karena ingin menyerah

1335 | Boks: Dituduh berencana menyerah

1338 | Dalam pelarian (1976-1978)

1339 | Penghancuran sumber makanan

1339 | **Penghancuran sumber makanan oleh tentara Indonesia**

1341 | **Penghancuran tanaman pangan oleh Fretilin**

1341 | Terusir oleh kelaparan dan pengeboman dari udara

1341 | **Manufahi**

1342 | **Covalima**

1343 | **Uaimori, Viqueque**

1344 | **Turiscail, Manufahi**

1345 | **Gunung Matebian**

1347 | Boks: Kesaksian orang-orang yang selamat dari pengeboman Matebian

1350 | **Manatuto**

1350 | **Alas, Manufahi**

1351 | **Kesaksian-kesaksian lain**

1354 | Boks: Pelarian di Katrai Leten dan Lesumau (Ermera)

1355 | Menyerah, kamp, dan kelaparan (1978-1981)

1357 | Menyerah: persebaran dan jumlah

1359 | Hidup dan mati di kamp yang dikontrol Indonesia

1359 | **Kamp penampungan sementara**

1360 | **Kelaparan dan kematian**

1361 | Boks: Penduduk Vemasse jatuh ke tangan Indonesia

1362 | **Registrasi, interogasi, eksekusi, dan kontrol**

1363 | Boks: Kewajiban berdasarkan hukum hak asasi manusia dan hukum perang

1363 | Kamp transit: Data terperinci yang diterima oleh Komisi

1364 | **Baguia (Baucau)**

1365 | **Oso-Ieru (Quelicai, Baucau)**

1365 | **Uatolari (Uatolari, Viqueque)**

1365 | **Lacluta (Viqueque)**

1366 | **Parlamento (Moro, Lautém)**

1366 | **Kota Railaco (Ermera)**

1366 | **Fatubessi (Hatolia, Ermera)**

1367 | **Uma Metan dan Lebos (Alas, Manufahi)**

1367 | Fahinehan (Fatuberliu, Manufahi)

1368 | Turiscai (Turiscai, Manufahi)

1368 | Metinaro (Metinaro, Dili)

1369 | Boks: Bagaimana sebagian penduduk bisa hidup di dalam kamp

1370 | Kamp-kamp permukiman

1371 | Lokasi kamp permukiman

1375 | Kondisi di kamp-kamp permukiman

1376 | Boks: Kehidupan di kamp permukiman Iliomar

1378 | Mau Chiga (Hato Bulico, Ainaro)

1379 | Hatolia, Ermera

1379 | Betano, Manufahi

1379 | Kematian di kamp permukiman

1381 | Tanggapan darurat kemanusiaan (1979-1980)

1382 | Sebelum September 1979

1382 | Gereja

1384 | Laporan saksi tentang bantuan Pemerintah Indonesia

1386 | Setelah September 1979

1386 | Akses ke Timor-Leste ditolak

1388 | Survei dan program bantuan CRS

1390 | Survei dan program bantuan kemanusiaan ICRC

1391 | Kontrol dan pembatasan

1393 | Dampak program bantuan terhadap penduduk

1393 | Komentar penutup

1395 | Boks: El Niño bukan penyebab kelaparan

1397 | Pemindahan paksa dan kelaparan terlokalisir pada dasawarsa 1980-an

1397 | Pembongkaran kamp-kamp permukiman: relokasi strategis

1398 | Pemindahan pada dasawarsa 1980-an: pilihan-pilihan

1398 | Kembali ke desa asal

1400 | Desa-desa baru

1401 | Perpindahan yang berulang

1402 | Pembatasan yang berlanjut di daerah-daerah permukiman

1403 | Redistribusi penduduk

1406 | Relokasi setelah pemindahan: beberapa contoh

1407 | Natar Ulun (Vemasse, Baucau)

1407 | Lacro (Lacro, Manatuto)

1408 | Lacluta (Viqueque)

1409 | Weberek, Weto (Alas, Manufahi)

1409 | Gleno (Ermera, Ermera)

1410 | Penahanan balasan dan hukuman kolektif: Ataúro dan kamp-kamp penahanan lainnya

1411 | Penahanan di Ataúro

1412 | **Boks:** Pemindahan paksa, penawanan, atau penahanan?

1413 | **Penahanan di Ataúro pada 1980**

1414 | **Penahanan di Ataúro pada 1981**

1416 | **Pemberontakan Kablaki**

1417 | **Kondisi di Ataúro**

1418 | **Tahanan-tahanan sipil**

1420 | **Meninggalkan Ataúro – tetapi tidak selalu kembali ke rumah**

1422 | **Pelanggaran seksual dan kelaparan di Bonuk (Ainaro)**

1422 | **Boks:** Pemindahan, kekerasan, dan kelaparan di Dare

1424 | Alternatif selain penahanan di Ataúro: Raifusa dan Dotik

1424 | **Dotik (Manufahi)**

1426 | **Raifusa (Betano, Same, Manufahi)**

1427 | **Lalarek Mutin (Viqueque)**

1428 | **Pendirian Lalarek Mutin**

1429 | **Kondisi ekstrem**

1429 | **Penghancuran makanan secara paksa**

1430 | **Pemberontakan-pemberontakan di Lautém**

1432 | Pemindahan sebelum dan sesudah Jajak Pendapat 1999

1434 | **Gejolak awal (November 1998-Maret 1999)**

1436 | **Liquiça**

1436 | **Kematian karena kekurangan di Liquiça**

1437 | **Viqueque**

1438 | **Covalima**

1440 | **Perpindahan massal pertama, April 1999**

1440 | **Liquiça**

1441 | **Bobonaro**

1443 | **Covalima**

1444 | **Dili**

1445 | **Oecussi**

1446 | **Ermera**

1446 | **Boks:** Kondisi pengungsi internal di Sare, Ermera, dan Faulara, Liquiça

1449 | **Hening sebelum badai (Mei sampai Agustus 1999)**

1450 | **Keamanan pangan dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi internal**

1450 | **Boks:** Serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan di Liquiça

1453 | **Pengungsi kembali untuk mendaftar**

- 1456 | Pemindahan dan deportasi besar-besaran, September 1999
 - 1456 | Dili
 - 1457 | Serangan terhadap kediaman Uskup Belo
 - 1458 | Kesaksian dari anggota milisi
 - 1461 | Bobonaro
 - 1462 | Pembantaian di Kantor Polisi Maliana
 - 1463 | Covalima
 - 1464 | Pembantaian di Gereja Suai
 - 1467 | Liquiça
 - 1468 | Distrik bagian tengah
 - 1471 | Boks: Pemindahan dan kekerasan seksual
 - 1472 | Distrik bagian timur
 - 1475 | Oecussi
- 1479 | Pengungsi di Timor Barat
 - 1480 | Boks: Deportasi massal ke Timor Barat
 - 1481 | Bantuan kemanusiaan
 - 1481 | Keamanan
 - 1482 | Pengungsi perempuan
- 1484 | Kembali ke rumah

..... 1485 | Temuan

- 1487 | Konflik internal Agustus-September 1975
- 1489 | Invasi
- 1491 | Penghancuran bahan makanan dan binatang ternak
- 1491 | Kehidupan dan kematian di pergunungan
- 1494 | Kamp dan permukiman di bawah kontrol militer Indonesia
- 1495 | Bantuan kemanusiaan
- 1496 | Desa relokasi strategis dan penginterniran
- 1498 | Pemindahan sebelum dan sesudah Jajak Pendapat 1999

Daftar tabel:

- 1304** | **Tabel 1:** Contoh kesaksian mengenai pengungsian akibat persaingan politik 1974-1975, yang dikumpulkan oleh Komisi
- 1305** | **Tabel 2:** Contoh kesaksian mengenai pemindahan terkait perang saudara, yang dikumpulkan oleh Komisi
- 1307** | **Tabel 3:** Beberapa komunitas yang melarikan diri ke Timor Barat saat konflik antarpantai
- 1327** | **Tabel 4:** Beberapa basis utama Resistansi
- 1357** | **Tabel 5:** Data kepolisian Indonesia tentang jumlah penduduk, Oktober 1977- Mei 1978
- 1371** | **Tabel 6:** Kamp permukiman pada akhir 1979
- 1381** | **Tabel 7:** Angka kematian rata-rata di beberapa kamp permukiman, sebelum dan setelah datangnya bantuan internasional
- 1384** | **Tabel 8:** Bantuan makanan oleh ABRI di kamp transit dan kamp permukiman, 1978
- 1405** | **Tabel 9:** Perubahan El Niño dan curah hujan di Timor-Leste
- 1405** | **Tabel 10:** Perubahan populasi subdistrik 1970-1980
- 1410** | **Tabel 11:** Rangkuman beberapa laporan terpilih dari diskusi komunitas
- 1418** | **Tabel 12:** Pilihan kesaksian dari mereka yang selamat dari Ataúro
- 1434** | **Tabel 13:** Jajak Pendapat dan pemindahan penduduk sipil: tanggal dan kejadian penting
- 1460** | **Tabel 14:** Deportasi dan pemindahan Distrik Dili (milisi Aitarak dan Tim Makikit)
- 1465** | **Tabel 15:** Deportasi dan pemindahan di Distrik Covalima (milisi Laksaur)
- 1473** | **Tabel 16:** Deportasi dan Pemindahan di Distrik Lautém (milisi Tim Alfa)
- 1473** | **Tabel 17:** Deportasi dan Pemindahan di Distrik Baucau (milisi Tim Saka)
- 1474** | **Tabel 18:** Deportasi dan Pemindahan di Distrik Manatuto (milisi Mahadomi)
- 1475** | **Tabel 19:** Deportasi dan Pemindahan di Distrik Viqueque (milisi Naga Merah)
- 1477** | **Tabel 20:** Deportasi dan Pemindahan di Distrik Oecussi (milisi Sakunar)

Daftar grafik:

- 1411** | **Grafik 1:** Jumlah pemindahan ke Atauro, 1974-1999
- 1433** | **Grafik 2:** Perkiraan kejadian pemindahan di Timor-Leste pada 1999
- 1440** | **Grafik 3:** Perkiraan jumlah rumahtangga yang berpindah pada 1999

Pemindahan paksa dan kelaparan

7.3.

Pendahuluan

1. Sebagai bagian dari mandatnya untuk menetapkan kebenaran yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia, Komisi melakukan penelitian mengenai pemindahan paksa dan kelaparan di Timor-Leste selama 1974-1999. Penelitian ini sangatlah penting untuk memberikan pengertian tentang penderitaan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan konflik karena pemindahan paksa adalah salah satu ciri utama dari konflik selama bertahun-tahun di Timor-Leste. Hampir setiap orang Timor-Leste yang hidup dalam tahun-tahun tersebut mengalami suatu jenis pemindahan, bahkan banyak yang mengalami lebih daripada satu kali.

2. Pemindahan dan akibat-akibatnya terjadi berulang kali di dalam masa mandat Komisi.

- Komisi menemukan bahwa sejak awal 1974 ada kasus-kasus penduduk desa melarikan diri dari kekerasan yang terjadi akibat ketegangan antarpantai.
- Perang saudara pada Agustus - September menyebabkan puluhan ribu manusia pindah dari tempat tinggal mereka, kebanyakan untuk jangka waktu pendek di dalam wilayah Timor-Leste, tetapi sebagian pindah secara paksa ke Timor Barat.
- Invasi Indonesia pada 7 Desember 1975 memicu evakuasi kebanyakan penduduk ke wilayah-wilayah pergunungan dan hutan di bawah kontrol Fretilin, dalam jumlah sangat besar sehingga menyebabkan kesulitan besar bagi sumberdaya dan kemampuan organisasional Fretilin. Bahkan setelah pasukan tentara Indonesia meningkatkan serangannya dan mengakhiri kehidupan relatif mantap orang-orang yang tinggal di wilayah ini, pemimpin Fretilin berusaha keras mencegah penduduk meninggalkan hutan dan pergunungan, termasuk dengan penggunaan hukuman keras terhadap mereka yang dicurigai ingin melakukannya.

- Serangan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan tentara Indonesia di antara pertengahan 1977 dan akhir 1978 membuat kondisi yang sebelumnya sudah sulit dalam hutan dan pergunungan tempat ratusan ribu orang Timor-Leste tinggal menjadi tidak dapat ditoleransi, dan pada akhirnya memaksa pemimpin Fretilin membolehkan mereka menyerah kepada pasukan Indonesia.
- Setelah berada di tangan Indonesia, mereka menghadapi nasib yang bahkan lebih buruk di dalam ‘kamp permukiman’: di tempat-tempat itu militer Indonesia menyuplai persediaan yang sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan melakukan pembatasan terhadap kebebasan bergerak sehingga memustahilkan para penghuni kamp menghidupi diri sendiri. Akibatnya terjadi kelaparan yang merenggut ribuan nyawa, kebanyakan karena militer Indonesia memberikan izin kepada lembaga-lembaga bantuan internasional untuk beroperasi di Timor-Leste hanya setelah tujuan militernya dicapai.
- Pada dasawarsa 1980-an orang yang tinggal di dalam kamp-kamp diperbolehkan kembali ke desa asal mereka, tetapi gerak mereka tetap dibatasi. Yang lainnya dipindahkan ke “desa-desa baru” dan tempat-tempat lain yang dipilih karena nilai strategisnya bagi militer Indonesia.
- Pada periode yang sama, pemindahan paksa terus digunakan sebagai bagian penting dalam strategi Indonesia melawan pemberontakan. Ketika Resistansi mulai bangkit lagi dari keadaan hampir hancur pada akhir dasawarsa 1970-an, militer Indonesia membalas dengan cara memindahkan orang-orang yang diduga memiliki hubungan dengan Resistansi, apakah sebagai anggota jaringan klandestin atau karena salah satu anggota keluarga mereka ada di pergunungan. Sejak 1980, ribuan orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak, dipindahkan ke Pulau Ataúro yang gersang. Mereka menanggung akibat dari kekurangan persediaan makanan dan barang kebutuhan pokok lainnya, setidaknya sampai ICRC diizinkan beroperasi di sana pada 1982. Serangan-serangan Fretilin menimbulkan pembalasan keras dari tentara Indonesia. Biasanya, seperti yang terlihat dari serangan-serangan terhadap Mau Chiga (Hato Builico, Ainaro) pada 1982 dan Kraras (Viqueque, Viqueque) pada 1983, pembalasan ini melibatkan pemindahan paksa seluruh penduduk desa, termasuk ke wilayah-wilayah yang belum pernah ditempati sebelumnya yang lagi-lagi persediaan makanannya minimal dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat kecil.
- Keseluruhan jangka waktu sekitar Jajak Pendapat 30 Agustus 1999 ditandai oleh berbagai jenis pemindahan, mulai dari pelarian dari kekerasan milisi dan TNI sebelum dan sesudah pemungutan suara, sampai evakuasi terorganisasi terhadap penduduk ke Timor Barat, Indonesia, setelah hasil pemungutan suara diumumkan. Kekerasan kelompok-kelompok milisi, yang banyak bekerjasama secara terbuka dengan TNI pendukungnya, mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia pada skala yang tidak pernah terlihat semenjak akhir dasawarsa 1970-an. Penahanan, penyiksaan

dan penganiayaan, pembunuhan, kekerasan seksual, dan rekrutmen paksa mencapai puncak baru pada 1999, demikian pula pemindahan paksa. Selama 1999 pemindahan terjadi sebagai pelarian diri spontan dari kekerasan dan intimidasi milisi, dan sebagai pergerakan terorganisasi warga dari rumah dan tempat-tempat lain yang mereka gunakan untuk mengungsi. Seperti di tahun-tahun awal, pemindahan dalam berbagai jenis keadaan pada 1999 memiliki pengaruh sangat buruk terhadap kemampuan penduduk untuk menghidupi diri, khususnya karena pihak berwenang Indonesia melakukan upaya untuk membuat mereka tidak mendapatkan bantuan kemanusiaan.

3. Seperti terlihat dari rangkuman pendek di atas, akibat pemindahan di Timor-Leste sangat luas. Salah satu cara tersering konflik bersenjata di seluruh dunia mengganggu kehidupan penduduk sipil sehari-hari ialah dengan mengakibatkan pemindahan penduduk semacam ini. Bahkan walaupun pemindahan tersebut terjadi secara sukarela, dengan mencerabut penduduk dari lingkungan yang mendukung kehidupan mereka, pemindahan pada umumnya akan mengakibatkan berbagai macam deprivasi, termasuk kelaparan, penyakit, dan kehilangan tempat tinggal yang memadai. Sering pemindahan menjadi satu bentuk penghukuman kolektif yang sewenang-wenang, dan dengan demikian terkait dengan pelanggaran berbagai macam hak asasi manusia, hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Semua ciri pemindahan ini tidak hanya ada di Timor-Leste, tetapi juga sangat mencolok.

4. Sebab mengapa kematian di antara 1975 dan 1999 lebih tinggi daripada yang diperkirakan akan terjadi dalam masa damai yang normal adalah besarnya jumlah kematian yang disebabkan oleh kelaparan dan penyakit yang langsung terkait pemindahan. Komisi menyimpulkan bahwa sedikitnya 84.200 orang meninggal dunia karena kelaparan dan penyakit yang berhubungan dengan pemindahan selama seluruh periode tersebut (lihat Bagian 6: Profil pelanggaran hak asasi manusia).

5. Di Timor-Leste, pemindahan juga berhubungan dekat dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Patut dicatat bahwa selama tahun-tahun ketika kematian akibat kelaparan dan penyakit mencapai puncaknya, yaitu pada 1975-1979, pemindahan, pembunuhan, dan penghilangan, dan banyak pelanggaran yang tidak menyebabkan kematian secara langsung—termasuk penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan—juga mencapai puncaknya. Bahkan, selama seluruh periode 1975-1999, fluktuasi semua kejadian ini cenderung berhubungan erat satu sama lain, yang dengan kuat memberi bukti bahwa mereka memiliki penyebab dasar yang sama, yang paling mungkin ialah intensitas operasi militer Indonesia. Kejadian-kejadian pada 1999 merupakan perkecualian dari temuan ini: walaupun pemindahan dan pelanggaran mematikan dan tidak mematikan meningkat sangat tinggi pada tahun tersebut dan kematian akibat deprivasi juga meningkat, jumlah kematian karena kelaparan dan penyakit tidak meningkat setajam tingkat pemindahan dan pelanggaran jenis lainnya, mungkin karena jangka waktu pemindahan pada tahun tersebut relatif pendek (lihat Bagian 6: Profil pelanggaran hak asasi manusia).

Definisi dan metodologi

6. ‘Pemindahan’ dan ‘kelaparan’ ialah istilah netral dalam pengertian bahwa keduanya dapat terjadi tanpa pelanggaran hak asasi manusia. Namun, Komisi telah menyimpulkan bahwa di dalam konteks konflik di Timor-Leste, sifat pemindahan dan kelaparan hampir selalu sedemikian rupa sehingga keduanya pun merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pada waktu yang sama diikuti oleh berbagai pelanggaran lain.

Pemindahan

7. Komisi mendefinisikan pemindahan sebagai suatu keadaan saat orang-orang meninggalkan tempat mereka hidup, di bawah suatu bentuk pemaksaan atau karena mereka sendiri telah menentukan bahwa keadaannya sedemikian rupa sehingga akan menjadi berbahaya kalau mereka tidak berpindah. Pemindahan bisa terjadi di dalam wilayah satu negara tertentu (‘pemindahan internal’) atau ke wilayah negara lainnya (‘pemindahan eksternal’). Di Timor-Leste pemindahan ‘internal’ dan ‘eksternal’ terjadi pada jangka waktu yang berbeda di dalam konflik. Di dalam laporan ini, Komisi menggunakan istilah ‘terpindah internal’ untuk orang-orang yang dipindahkan di dalam batas wilayah Timor-Leste,[†] dan ‘pengungsi’ untuk mereka yang dipindahkan ke Timor Barat.[†]

8. Secara definisi, pemindahan tidak pernah terjadi secara sukarela. Ia mungkin terjadi karena penggunaan langsung kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang yang berpindah. Ia juga mungkin terjadi secara spontan, atau tidak secara paksa, seperti situasi saat penduduk sipil melarikan diri dari tentara invasi yang mendekat.

9. Secara hukum, pemindahan terjadi secara paksa jika terjadi dalam cara yang melanggar hukum. Tanpa bukti yang mencukupi bahwa satu pihak di dalam konflik bersenjata telah melanggar hukum ketika melakukan pemindahan orang, pemindahan tidak bisa disebut sebagai pemindahan paksa. Sesuai dengan hukum internasional, Komisi mendefinisikan ‘pemindahan paksa’ sebagai pemindahan yang diakibatkan oleh penggunaan kekerasan fisik atau oleh “ancaman kekerasan atau

* Menurut *UN Guiding Principles on Internal Displacement*, E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 Februari 1998: “Orang-orang yang dipindahkan secara internal ialah orang-orang atau sekelompok orang yang telah secara paksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat tinggal biasanya, khususnya sebagai akibat dari atau untuk menghindari pengaruh konflik bersenjata, situasi kekerasan yang umum, pelanggaran hak asasi manusia, atau bencana yang disebabkan oleh manusia maupun alam, dan yang tidak melewati batas wilayah Negara yang diakui internasional.”

† Pasal 1 *Convention Relating to the Status of Refugees* 1951 mendefinisikan seorang pengungsi sebagai orang yang berdasarkan pada “rasa takut yang kuat dasarnya akan dianiaya atas dasar ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan kepada suatu kelompok sosial atau pandangan politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak mampu, atau karena rasa takut tersebut, tidak ingin menempatkan dirinya di bawah perlindungan negara tersebut.” Pada bab ini istilah ‘pengungsi’ digunakan untuk mereka yang dipindahkan ke Timor Barat selama pendudukan Indonesia, baik mereka memenuhi definisi tersebut maupun tidak.

pemaksaan, seperti yang disebabkan oleh rasa takut akan kekerasan, penderitaan, penahanan, penekanan psikologi, atau penyalahgunaan wewenang terhadap ... orang atau sekelompok orang atau orang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari suatu keadaan yang memaksa.”¹ Pindahan paksa di dalam wilayah satu negara disebut ‘pengiriman paksa’; pemindahan paksa ke wilayah negara lain disebut ‘deportasi’.²

10. Pindahan paksa tidak selalu melibatkan penggunaan nyata kekerasan terhadap orang atau sekelompok orang yang dipindahkan. Pindahan paksa dianggap terjadi di dalam keadaan di mana, misalnya, penduduk sipil diberi pilihan untuk menaiki truk yang akan memindahkan mereka dari rumah mereka, tetapi kenyataannya mereka memiliki alasan yang layak untuk merasa takut akan pembunuhan atau kekerasan apabila mereka menolak. Ini tidak mencakup semua keadaan di mana penduduk sipil melarikan diri untuk menghindari pertempuran antara pasukan penyerang dan pasukan yang bertahan.

11. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak selalu membuat pemindahan menjadi ilegal. Kekerasan bisa digunakan untuk memindahkan sekelompok orang apabila pihak yang menggunakan kekerasan itu bisa mengesahkan tindakan mereka dari segi keselamatan orang-orang yang dipindahkan atau untuk kebutuhan militer. Namun, di dalam keadaan tidak adanya kondisi yang bisa mengesahkan tindakan tersebut, pemindahan paksa, apabila digunakan sebagai bagian dari suatu serangan yang luas atau sistematis terhadap penduduk sipil, bisa tergolong kejahatan terhadap umat manusia atau, apabila diarahkan terhadap penduduk, seperti penduduk sipil yang dilindungi oleh Konvensi-Konvensi Jenewa, menjadi tergolong kejahatan perang.³

12. Menurut standar universal hak asasi manusia, semua orang memiliki hak atas kebebasan bergerak dan kebebasan memilih tempat tinggal.⁴ Pembatasan atas hak-hak ini hanya diperbolehkan ketika hal ini dibutuhkan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum, atau untuk melindungi hak-hak orang lain. Pembatasan dalam bentuk apapun harus diberikan secara hukum, sesuai dengan fungsi perlindungan yang dijalankan, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia lainnya.⁵

13. Prinsip-prinsip Pembimbing PBB mengenai Pemindahan Internal (UN Guiding Principles on Internal Displacement) menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk dilindungi dari pemindahan sewenang-wenang dari rumahnya, termasuk di dalam situasi konflik bersenjata, kecuali jika dibutuhkan oleh kepentingan keamanan penduduk sipil atau menjadi keharusan secara militer.⁶ Jika penduduk dipindahkan, pihak berwajib harus menjamin kesejahteraan mereka, termasuk menjamin akses pada makanan, air, tempat berlindung, dan pelayanan medis.⁷

.....
* Maka pemindahan paksa dianggap terjadi di dalam keadaan di mana penduduk sipil “tidak membuat pilihan yang sebenarnya untuk pergi, melainkan bereaksi secara otomatis terhadap kepastian bahwa keselamatan mereka bergantung pada pelarian diri mereka”. [*Prosecutor v Radislav Krstic*, Kasus ICTY No. IT-98-33-T, Keputusan Majelis Persidangan, 2 Agustus 2001, Paragraf 530].

14. Menurut hukum humaniter internasional, pemindahan paksa penduduk sipil diizinkan dilakukan oleh suatu kekuatan pendudukan hanya dalam kasus-kasus di mana pengosongan suatu wilayah dibutuhkan untuk keamanan penduduk tersebut atau untuk alasan keharusan militer. Bahkan di dalam kondisi seperti itu penduduk sipil tidak boleh dipindahkan keluar dari wilayah pendudukan kecuali jika mustahil untuk menghindarkan hal tersebut terjadi. Ketika pemindahan seperti itu diperlukan, kekuatan pendudukan harus memastikan diberikannya akomodasi yang layak, bahwa pemindahan terjadi dalam keadaan yang sehat dan aman, bahwa anggota keluarga tidak dipisahkan, dan bahwa orang-orang yang dipindahkan dikembalikan ke rumah masing-masing sesegera mungkin setelah tindakan permusuhan di wilayah mereka telah selesai.⁸

15. Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, di dalam semua kasus lain—yaitu di mana pemindahan tidak benar-benar dibutuhkan—pemindahan paksa penduduk sipil di dalam wilayah yang diduduki atau keluar dari wilayah tersebut dilarang oleh hukum humaniter selama masa pendudukan.⁹ Pelanggaran ketentuan ini merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa IV.¹⁰ Selain itu, ketika pemindahan paksa dilakukan sebagai bagian dari serangan luas atau sistematis terhadap penduduk sipil, ia bisa digolongkan sebagai kejahatan terhadap umat manusia.^{*}

16. Selain itu, tindakan-tindakan lainnya yang secara tidak langsung menyebabkan pemindahan besar-besaran penduduk juga dilarang. Serangan terhadap rumah-rumah penduduk sipil,¹¹ serangan yang tidak membedakan antara penduduk sipil dengan petempur,¹² dan serangan yang dirancang untuk meneror penduduk sipil¹³ semuanya dilarang. Pelanggaran atas hal-hal ini oleh siapapun merupakan tindakan kejahatan perang.

Kelaparan

17. Kelaparan telah didefinisikan sebagai kekurangan yang luas atas akses pada makanan yang mencukupi untuk mempertahankan hidup, yang menyebabkan kematian akibat kekurangan gizi dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengannya.¹⁴ Seperti pemindahan, kelaparan sendiri bukanlah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kelaparan bisa disebabkan oleh sebab-sebab alami, seperti kekeringan atau kemiskinan yang luarbiasa. Dengan mengganggu kehidupan sehari-hari, konflik bersenjata secara rutin menyebabkan kekurangan makanan. Selama konflik bersenjata, penduduk sipil tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang menyediakan sarana kehidupan bagi mereka, seperti memproduksi makanan, menghasilkan pendapatan, atau pergi ke pasar untuk menyediakan sarana bagi pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Di dalam kasus-kasus yang ekstrem, di dalam masa perang kekurangan makanan berubah menjadi kelaparan.

^{*} Pasal 5(d) Statuta ICTY (menyebut 'deportasi' tetapi ditafsirkan mencakup pemindahan internal dan eksternal: *Prosecutor v Milomir Stakić*, ICTY Case No. IT-97-24-T, Trial Chamber Judgment, 31 Juli 2003, paragraf 679); Pasal 7(1)(d) Statuta Roma untuk Pengadilan Pidana Internasional.

18. Namun, sudah semakin diakui bahwa kelaparan pada kenyataannya jarang merupakan akibat dari kejadian alamiah semata dan bahwa pelaku manusia memiliki peran besar di dalam menciptakannya. Iklim yang ekstrem, lingkungan hidup yang tidak bersahabat, dan kemiskinan telah menjadikan rasa lapar (*hunger*) sebagai ciri yang selalu ada dan rasa lapar yang ekstrem menjadi ciri yang sering ada dari kehidupan di Timor-Leste. Namun, wabah kelaparan (*famine*) cukup langka di Timor-Leste, dan hampir selalu terkait dengan konflik bersenjata.⁷

19. Ahli ekonomi ternama Amartya Sen telah berusaha untuk membedakan antara ‘fenomena kelaparan “biasa” yang dikenal oleh banyak penduduk Timor-Leste dengan ‘ledakan keras’ yang berupa kelaparan. Ia mengemukakan bahwa “kelaparan adalah ciri dari orang-orang yang tidak memiliki cukup makanan. Ini bukan ciri tidak adanya cukup makanan.” Ia mendefinisikan wabah kelaparan (*famine*) sebagai suatu “perwujudan yang istimewa parah dari kelaparan (*starvation*) yang menyebabkan kematian yang luas.”¹⁵

20. Di Timor-Leste kelaparan terjadi antara 1978 dan 1980 selama dan sesudah operasi militer intensif Indonesia untuk menguasai wilayah tersebut. Kekurangan makanan yang serius yang menyebabkan kematian juga terjadi selama dasawarsa 1980-an dan pada 1999. Pada semua waktu tersebut, dan Komisi percaya hal ini ditunjukkan oleh Bagian ini, yang terjadi bukanlah karena makanan tidak bisa disediakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sebaliknya, orang-orang tersebut secara positif dihalangi untuk memperoleh makanan dan untuk mendapatkan sumber-sumber makanan.

21. Di dalam konteks inilah kelaparan terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Pelanggaran-pelanggaran ini lebih daripada sekadar pengingkaran hak rakyat atas makanan dan kebutuhan dasar lainnya, walaupun negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak tersebut. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, semua orang memiliki hak atas makanan yang memadai¹⁶ dan bebas dari kelaparan.¹⁷ Sudah semestinya makanan tersedia secara mencukupi di dalam hal kualitas dan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk.¹⁸ Dengan menghormati hak-hak ini negara-negara harus, misalnya, mengambil langkah untuk mengurangi kekurangan gizi.¹⁹ Suatu negara juga harus memastikan bahwa semua orang yang berada di bawah kontrolnya memiliki akses kepada kebutuhan pangan dasar.²⁰ Semua orang juga memiliki hak atas air²¹ dan tempat tinggal yang layak.²²

22. Kewajiban-kewajiban ini juga bisa dilanggar secara tidak langsung, misalnya dengan menjalankan kebijakan yang membawa kepada pelanggaran jenis lain yang tidak sesuai dengan hak atas pangan.²³ Ini termasuk pengingkaran kebebasan bergerak, pelanggaran hak individu untuk hidup di tempat yang diinginkan, penolakan atas akses kepada bantuan, penghancuran sumber pangan, dan akhirnya pelanggaran terhadap hak untuk hidup.²⁴

.....
* Kelaparan adalah sebab utama 40.000 kematian yang diperkirakan terjadi selama masa pendudukan Jepang di Timor-Leste [lihat Bagian 3: Sejarah konflik].

23. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini merupakan kejahatan dalam hukum internasional. Jadi, dalam konflik bersenjata internasional, kelaparan massal adalah suatu kejahatan perang apabila ia digunakan sebagai senjata perang. Di antara metode yang dipandang sebagai contoh penggunaan kelaparan massal sebagai senjata perang ialah menghalang secara sengaja pemberian bantuan dan penghancuran sumber pangan.²⁵ Kelaparan juga bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap umat manusia apabila menghalang untuk mendapatkan makanan digunakan di dalam cara yang luas dan sistematis untuk membinasakan penduduk sipil.²⁶ Selama pendudukan, penguasa pendudukan memiliki tanggung jawab tambahan untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal. Ia harus memastikan bahwa penduduk mendapatkan makanan, air, dan pelayanan medis yang mencukupi. Hal ini berarti mengimpor sumberdaya atau menerima bantuan dari luar ketika persediaan lokal tidak mencukupi.²⁷

Mengumpulkan informasi

24. Konflik di Timor-Leste menyebabkan ribuan orang terpindahkan dari rumahnya, di dalam banyak kasus lebih daripada satu kali. Pemandahan, berdasarkan sifat dasarnya, mengurangi kemampuan para korban untuk melindungi diri sendiri atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Di Timor-Leste, periode pemandahan terjadi bersamaan dengan peningkatan kematian karena deprivasi. Hal ini memberikan tantangan kepada Komisi. Banyak orang yang melihat atau mengalami apa yang terjadi di dalam tahun-tahun pemandahan dan kelaparan, telah mati. Hal ini berarti bahwa Komisi harus mengembangkan inisiatif khusus untuk mempelajari pemandahan, kelaparan, dan kematian karena deprivasi.

1. Komisi mengumpulkan 7.669 pernyataan naratif dari 13 distrik di Timor-Leste dan di kamp-kamp pengungsian di Timor Barat. 43,6 % (3.344 dari 7.669) deponen melaporkan kejadian-kejadian di mana kematian yang berhubungan dengan kelaparan atau pemandahan telah terjadi. Di dalam proses pengambilan pernyataan Komisi, para deponen melaporkan seluruhnya 4.869 kematian karena deprivasi dan 16.977 kejadian pemandahan.
2. Ribuan orang berbicara tentang pemandahan dan kelaparan di dalam lokakarya-lokakarya Profil Komunitas. Lokakarya ini difasilitasi oleh para petugas Komisi untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk secara kolektif mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dan akibatnya pada komunitas.
3. Sebelas korban dan saksi ahli memberikan kesaksian pada Audiensi Publik Nasional Komisi mengenai Pemandahan Paksa dan Kelaparan yang diadakan di Dili pada 28-29 Juli 2003.
4. Petugas Komisi melakukan hampir seratus wawancara individual dengan para saksi dan orang-orang yang selamat dari pemandahan dan kelaparan di semua distrik kecuali Oecussi.

5. Komisi melakukan penyelidikan khusus (Proyek Angka Kematian) yang mencakup dua kegiatan pengumpulan data besar. Para petugas dan sukarelawan melakukan sensus batu nisan bernama maupun tidak bernama yang ditemukan di 1.057 perkuburan umum di seluruh wilayah Timor-Leste.* Petugas juga melakukan survei atas 1.396 rumahtangga yang dipilih secara acak, menanyakan kepada mereka tentang pemindahan dan kematian di dalam keluarga mereka selama masa konflik. Data yang dikumpulkan oleh Komisi digunakan untuk membuat perkiraan statistik mengenai jumlah kematian dan pola pemindahan yang terjadi selama masa konflik. The Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) membantu Komisi mengumpulkan dan menganalisis data tersebut (lihat Bagian 6: Profil pelanggaran hak asasi manusia).†
6. Orang-orang dan organisasi di dalam dan luar Timor-Leste yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai gejala tersebut memberikan dokumentasi, bahan-bahan, dan submisi mengenai pemindahan dan kelaparan kepada Komisi.
7. Para peneliti dan petugas Komisi mempelajari bahan-bahan yang sudah diterbitkan maupun belum, buku-buku, acara radio, rekaman film, dan foto yang dibuat sejak 1974.

Pengungsian dan kelaparan akibat konflik internal (1974-1975)

Pengungsian akibat persaingan politik (1974-1975)

25. Komisi telah menerima sejumlah laporan tentang pengungsian internal dan eksternal besar-besaran antara 1974 dan 1975. Kejadian-kejadian ini berbeda dengan berbagai peristiwa sebelum dan selama konflik bersenjata internal pada Agustus 1975. Sementara waktu yang tepat tentang kejadian sering tidak jelas, kejadian-kejadian tersebut jelas menunjukkan bahwa pertikaian antara kelompok-kelompok politik cukup serius untuk menyebabkan penduduk meninggalkan rumah mereka sebelum pecahnya konflik bersenjata internal.

26. Sebelum pecahnya konflik bersenjata internal, ketegangan telah meningkat di seluruh wilayah. Ada beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya ketegangan:

* Secara keseluruhan, telah disurvei 1.057 dari 1.631 perkuburan umum.

† HRDAG (Human Rights Data Analysis Group) ialah tim yang membantu proyek-proyek hak asasi manusia di seluruh dunia dalam penggunaan sistem manajemen informasi dan peralatan ilmiah dan statistik untuk mengumpulkan dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia skala besar. HRDAG adalah proyek Benetech Initiative, usaha nirlaba yang memberikan bantuan teknis dan manajemen yang memungkinkan HRDAG untuk mencapai misinya.

persaingan antara partai-partai politik dalam mencari pengikut, yang terutama terpusat pada pembagian kartu anggota partai dan pendirian kantor-kantor cabang; konflik antara para pemimpin tradisional dengan para pemimpin partai-partai baru; dan yang lebih luas transformasi dari konflik yang berakar sejarah menjadi konflik antarpartai. Oleh karena itu perang sipil bukanlah kekerasan yang meletus tiba-tiba, melainkan peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi spiral kekerasan yang sudah ada sebelumnya, yang salah satu akibat sampingannya adalah pelarian dan pengungsian penduduk.

| Tabel 1: Contoh kesaksian mengenai pengungsian akibat persaingan politik 1974-1975, yang dikumpulkan oleh Komisi | | |
|--|---|---|
| Sumber | Nama dan Tempat | Rangkuman |
| HRVD 00922 | Samalete, Taraso (Railaco Ermera) | Pada 1974, karena takut akan intimidasi dari anggota-anggota UDT, lebih daripada 70 orang lari ke hutan. Pada waktu yang sama, para pendukung Fretilin membunuh tujuh anggota UDT yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan sejumlah pendukung Fretilin sebelumnya. Akibatnya, satu pembunuhan pembalasan lagi terhadap satu orang dilakukan oleh para pendukung UDT. |
| Profil Komunitas CAVR | Edi (Maubisse, Ainaro) | Pada 1974 dan 1975, mayoritas penduduk masuk Fretilin, sehingga membuat UDT malu dan marah. Dua pemimpin UDT di Edi memanggil pasukan dari Ermera, Atsabe, dan Maubisse. Mereka membakar 1.872 rumah, gudang kopi, dan gudang makanan, membunuh ternak, dan membawa yang masih hidup ke Maubisse. Setelah melakukan operasi selama empat hari, mereka mendirikan cabang di Mauosahi Uslakatei dan satu cabang kecil di Kamlai. Kemudian mereka membunuh dua orang pendukung Fretilin. Para pendukung Fretilin melarikan diri ke Turisca. Setelah empat hari pasukan Fretilin membawa para pendukung mereka kembali dari Turisca. Kedua pihak bertempur di Manelobas dan pasukan UDT melarikan diri ke Maubisse. |
| Profil Komunitas CAVR | Aldeia Beco, Suco Beidasi (Fatululik, Covalima) | Pada Oktober 1974 para pemimpin Fretilin membagikan kartu anggota partai, yang juga dilakukan oleh Apodeti pada November 1974. Kedua partai itu mulai bersaing menarik anggota. Sekitar 500 orang dari Aldeia Beco lari ke Lamaknen di Timor Barat. |

27. Komisi mendengar kesaksian bahwa suasana ketakutan yang menyebabkan pengungsian juga terjadi di distrik-distrik lain selama masa awal pembentukan partai politik, yang menyebabkan terjadinya pemindahan.²⁸

Pengungsian yang disebabkan oleh konflik internal

28. Pengungsian yang terjadi akibat konflik bersenjata antara dua partai politik utama, UDT dan Fretilin, pada Agustus - September 1975, berlangsung lebih luas dan lebih lama. Partai-partai lain, khususnya Apodeti, terjerat dalam konflik bersenjata ini. Para pendukung dari pihak-pihak yang bertikai, keluarga mereka, dan rakyat biasa berusaha menyelamatkan diri dari kekerasan yang meletus di seluruh negeri. Para pendukung partai politik, kadang-kadang seluruh desa, lari karena takut kehilangan nyawa. Di Dili kekerasan politik menyebabkan terjadinya pengungsian dan kekurangan bahan makanan ketika penduduk melarikan diri dari pertempuran, seperti yang direkam dalam salah satu Profil Komunitas CAVR:

Pada 1975 situasi menjadi panas. Orang-orang mulai saling melempar batu dan berkelahi menggunakan tombak dan parang. Beberapa orang menggali ruang bawah tanah untuk bersembunyi... Semua orang meninggalkan rumah mereka dan bersembunyi di tempat-tempat sekitar. Beberapa orang lari bersembunyi di gua-gua selama tiga bulan. Makanan sangat sulit didapat, banyak yang lapar tapi tidak ada orang yang meninggal karena kelaparan.²⁹

29. Tabel di bawah ini memperlihatkan beberapa contoh dari kesaksian mengenai pemindahan terkait perang saudara yang dikumpulkan oleh Komisi.

| Tabel 2: Contoh kesaksian mengenai pemindahan terkait perang saudara, yang dikumpulkan oleh Komisi | | |
|--|--|--|
| Sumber | Nama dan Tempat | Rangkuman |
| Profil Komunitas CAVR | Maulau (Maubisse, Ainaro) | Pada 7 dan 14 Agustus 1975, pasukan Fretilin dari Liquidoe, Turisca, dan Manumera melancarkan satu serangan tiga arah ke Maleria, Lumluli, dan Usululi, membunuh banyak orang dan membakar 675 rumah di tiga <i>aldeia</i> tersebut. Mereka juga membunuh banyak binatang ternak dan membawa lainnya ke Liquidoe. Orang-orang UDT lari ke Maubisse meninggalkan orang dan anak-anak di Maulau. Dalam serangan lain yang terjadi seminggu kemudian, pada 14 Agustus, pasukan Fretilin dari Turisca membakar delapan rumah di Lakamalikau. |
| HRVD 09078 | Daniel Pereira Pires, Leubuti, Foholau (Turisca, Manufahi) | Pada September 1975, karena adanya serangan dari pendukung Fretilin, penduduk dari <i>aldeia</i> Leobuti, Foholau (Turisca), yang sebagian besar adalah pendukung Apodeti, menyelamatkan diri ke hutan-hutan sekitar. Setidaknya tiga orang tertangkap dan dibunuh oleh para pendukung Fretilin. Beberapa yang selamat dipaksa pindah ke Turisca, tempat mereka bekerja di ladang-ladang. |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| HRVD 00163 | Celestina da Costa Oliveira, Wedauberek, Same, Manufahi | Begitu pecah konflik antara UDT dan Fretilin pada 11 Agustus 1975, sebagian besar penduduk Letefoho (Same, Manufahi) lari ke gunung, karena takut akan kekerasan lebih lanjut. Mereka takut ditangkap oleh para pendukung UDT, setelah terjadinya penangkapan dan pembunuhan terhadap sekelompok pendukung Fretilin oleh UDT di Wedauberek. |
| Profil Komunitas CAVR | Asumanu, Liquiça | Pada 13 Agustus 1975 UDT mengibarkan benderanya di Bilamar di <i>aldeia</i> Caicasico dan membakar rumah-rumah serta membunuh enam orang di <i>aldeia</i> Siskoolema dan Hatumatilu. Sebagian penduduk lari ke <i>Base 1</i> di Leorema dan yang lainnya melarikan diri ke <i>Base 2</i> di wilayah Loes (Maubara, Liquiça), sementara sejumlah kecil lari ke hutan. |

30. Menurut perkiraan ICRC, sebanyak 50% penduduk mungkin telah pindah sebagai akibat dari konflik internal bersenjata tersebut.³⁰ Dengan berhentinya permusuhan di sebagian besar wilayah pada pertengahan September 1975, sebagian besar penduduk yang mengungsi sudah dapat kembali ke rumah masing-masing. Namun demikian, sejumlah besar pemimpin dan pejuang UDT yang kalah melarikan diri ke wilayah perbatasan, dan pada akhirnya melintasi batas masuk ke wilayah Timor Barat (Indonesia). Sejumlah anggota partai-partai yang bersekutu dengan para pendukung UDT dan Apodeti juga mengungsi ke Timor Barat. Khususnya di distrik-distrik perbatasan, yaitu Covalima dan Bobonaro, para pemimpin UDT dan Apodeti memaksa para pendukung Fretilin dan mereka yang bukan pengikut partai manapun untuk ikut lari.

Pelarian ke Timor Barat

31. Di antara para pendukung UDT dan Apodeti yang melarikan diri ke Timor Barat setelah aksi bersenjata balasan Fretilin pada Agustus 1975, terdapat sejumlah penduduk sipil yang pergi ke Timor Barat karena benar-benar takut akan keselamatan mereka. Mereka yakin bahwa mereka akan menjadi sasaran kekerasan oleh Fretilin.

32. Sejumlah pendukung UDT melintasi perbatasan untuk melakukan latihan militer dan bergabung dengan tentara Indonesia untuk melanjutkan perang melawan Fretilin. Komisi tidak menganggap kasus-kasus seperti ini sebagai pengungsian karena melibatkan petempur yang pindah karena keinginan sendiri dan bukan penduduk sipil. Namun demikian, sering kali kedua kelompok tersebut bercampur dan sulit dibedakan.

33. Dalam kesaksian kolektif yang disampaikan oleh komunitas-komunitas di Distrik Covalima, melalui diskusi-diskusi Profil Komunitas CAVR di Holpilat, Lela (Maukatar, Covalima), Belulik Kraik (Fatumean, Covalima), dan Aitoun,

Beidasi (Fatululik, Covalima), terungkap gambaran yang jelas bahwa para pendukung Apodeti dan UDT lari melintasi perbatasan pada akhir 1975 karena takut kehilangan nyawa.⁷

34. Paulo de Fatima Martins, dalam wawancara dengan polisi PBB, menyatakan bahwa ia dan satu kelompok yang terdiri atas 900 orang—termasuk perempuan dan anak-anak—mengungsi pada awalnya dari Hatolia (Ermera) menuju Tatae Uhu (Lisapat, Hatolia), kemudian melanjutkan ke Cailaco, Purugua di Maliana (Bobonaro) pada pertengahan September, sebelum sampai di Haekesak dekat Atambua di Timor Barat pada 16 September.³¹

35. Komisi mendengar kesaksian dari seorang mantan pemimpin UDT di Covalima, Emeliano Teixeira (Rui) Lopes, dan beberapa orang lainnya yang mengatakan bahwa mereka mengungsi ke Timor Barat bersama 400 orang penduduk sipil. Mereka menempati kamp-kamp pengungsi sementara di Alas (Betun, Timor Barat, Indonesia) selama beberapa hari, kemudian dipindahkan ke Atambua untuk bergabung dengan para pengungsi asal Timor-Leste yang lain. Emiliano (Rui) Lopes bercerita kepada Komisi:

Di Suai kami tidak memaksa penduduk untuk pergi ke Indonesia. Kami sadar hidup di Indonesia juga berat. Hanya kami yang terlibat yang pergi. Tapi sejumlah penduduk yang melarikan diri juga mengikuti kami. Tidak banyak. Tapi di Dili dan Ermera mereka membawa semua orang. Mereka yang mendukung UDT semuanya melarikan diri.³²

36. Tabel di bawah ini mencantumkan beberapa komunitas yang tinggal di dekat perbatasan, yang karena takut akan kekerasan antarpantai, melarikan diri ke Timor Barat.

| Tabel 3: Beberapa komunitas yang melarikan diri ke Timor Barat saat konflik antarpantai | |
|---|--|
| Profil Komunitas CAVR | Rangkuman |
| Odoumau (Maliana, Bobonaro) ³³ | Pada 2 September 1975 penduduk desa lari berpecah, sampai ke gunung dan ke Builalo (Timor Barat). Penduduk Odoumau mengungsi di Timor Barat selama sembilan bulan. |

* Profil Komunitas CAVR Holpilat, Lela (Maukatar, Covalima) 18 Februari 2003 mengungkapkan bahwa para pendukung Apodeti mencari perlindungan di Lambemans (Belu, Timor Barat); Profil Komunitas CAVR Belulik Kraik (Fatumean, Covalima) 28 Juli 2003 memaparkan bagaimana penempatan pasukan Falintil di perbatasan setelah kebangkitan bersenjata membuat para pemimpin partai oposisi dan pendukung mereka mengungsi ke Timor Barat; Profil Komunitas CAVR Aitou, Beidasi, Subdistrik Fatululik, Distrik Covalima 17 Oktober 2002 mencatat bahwa pada 1974 sepuluh keluarga sudah pindah ke Lamaknen (Belu, Timor Barat). Kemudian, pada Oktober 1975, pendukung-pendukung UDT dan Apodeti mengungsi ke Timor Barat.

| | |
|---|---|
| <i>Aldeia</i> Aitoun, <i>Suco</i> Beidasi (Fatululik, Covalima) ³⁴ | Fretilin tiba di <i>aldeia</i> Aitoun, dengan pendukungnya dari Fatululik. Sekitar sepuluh keluarga melarikan diri ke Lamaknen di Timor Barat karena intimidasi dan ancaman dari pendukung Fretilin. |
| <i>Suco</i> Lela (Maukatar, Covalima) ³⁵ | Pada 20 November 1975, sekitar 650 orang penduduk menyeberangi perbatasan bersama pemimpin UDT, Rui Emiliano Teixeira (Rui) Lopes. |
| <i>Suco</i> Hopilat (Maukatar, Covalima) | Setelah Fretilin melancarkan aksi pembalasan bersenjata pada 20 Agustus 1975, empat keluarga pendukung Apodeti melarikan diri ke Lamaknen di Timor Barat. |
| <i>Suco</i> Ritabou (Maliana, Bobonaro) ³⁶ | Pendukung Fretilin ditahan oleh anggota-anggota UDT pada 11 Agustus 1975. Pada 2 September 1975, penduduk desa mendengar suara tembakan dan langsung melarikan diri ke Haekesak, Wedomo, dan Atambua di Timor Barat. Setelah sembilan hari sebagian dari mereka kembali ke Batugade, kemudian, karena takut akan serangan dari laut, pindah ke Mota Ain dan Atambua di Timor Barat. Kondisi sangat sulit di penampungan, penyakit mewabah, dan akses kepada air bersih terbatas. ICRC akhirnya mulai memberikan bantuan ke tempat-tempat pengungsian. |
| <i>Suco</i> Holsa (Maliana, Bobonaro) ³⁷ | Penduduk laki-laki direkrut untuk menyerang Fretilin di Dili, tapi kemudian UDT kalah. Ketika para lelaki ini kembali ke Maliana, penduduk lari ke segala arah, banyak dari mereka tidak membawa perbekalan. Sebagian orang lari ke gunung, sementara yang lainnya ke Builalo di Timor Barat. Beberapa pendukung Fretilin yang ikut dalam pengungsian ke Timor Barat diancam dan kemudian dibunuh. |
| <i>Suco</i> Memo (Maliana, Bobonaro) ³⁸ | Pada 5 September 1975, mendengar suara tembakan, penduduk Halimesak melarikan diri menyeberangi sungai ke Bauilalu di Timor Barat. Mereka membuat rumah darurat dan hidup dengan mengumpulkan makanan dari hutan. Awalnya beberapa keluarga tetap tinggal di Memo, tetapi pada akhir bulan mereka bergabung dengan 5.000-10.000 pengungsi yang sudah berkumpul di Bauilalu. Banyak yang mati karena diare dan malaria, dan pada waktu itu terjadi kekurangan bahan makanan yang serius. |
| <i>Suco</i> Raifun (Maliana, Bobonaro) ³⁹ | Sekitar 500 orang lari ke gunung dan yang lainnya ke Haekesak di Timor Barat. Di Haekesak, mereka tinggal di tenda-tenda dan menerima makanan, pakaian, dan uang, tetapi penyakit telah menyebar dan banyak yang meninggal dunia. Mereka tinggal di Haekesak selama setahun. |
| <i>Suco</i> Vaviquinia (Maubara, Liquisa) ⁴⁰ | Ketika Fretilin membalas, para pemimpin UDT seperti João Carrascalão dan Raja Gaspar Nunes melarikan diri ke Batugade dengan perahu nelayan. |
| <i>Suco</i> Leimea Sorin Balu (Hatolia, Ermera) ⁴¹ | Sejumlah orang menyerahkan diri, lainnya lari bersama para pemimpin UDT ke Atambua. Sekitar 120 orang menjadi pengungsi di Haekesak di Timor Barat selama satu tahun. |

Pemindahan paksa ke Timor Barat

37. Tidak semua orang yang berada di kamp-kamp pengungsi di Timor Barat atau yang dilatih oleh ABRI untuk berbagai operasi di Timor-Leste lari secara sukarela. Beberapa orang dilaporkan dipaksa melintasi batas oleh pemimpin-pemimpin UDT.

38. Komisi mendapatkan pernyataan dari orang-orang yang dibawa paksa melintasi perbatasan dan, dalam beberapa kasus, direkrut sebagai TBO, Hansip, atau Partisan. Misalnya, Francisco da Silva Araújo asal Ermera memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai deportasi paksa sekitar 1.000 orang ke Atambua oleh UDT melalui Haekesak. Kelompok tersebut melintasi perbatasan pada 2 September, dan tidak kembali ke Ermera hingga Juni 1976.⁴²

39. Benvinda dos Santos asal Memo (Maliana, Bobonaro) adalah satu dari sejumlah orang yang mengatakan kepada Komisi bahwa ia telah dipaksa oleh F36, orang Timor-Leste liurai Memo dan seorang pemimpin UDT setempat, untuk melarikan diri ke Atambua pada 1975, karena liurai tersebut mengatakan akan terjadi pergolakan besar-besaran antara partai UDT dan Fretilin. Begitu mereka tiba di Atambua, suaminya, Malibere, ditangkap oleh seorang anggota Hansip, F39, yang membawa Malibere ke Sumur, tempat ia kemudian ditikam sampai mati bersama Clementino dan Americo.⁴³

40. Francisca Argentina, juga berasal dari Memo, mengaku dirinya anggota Fretilin tetapi tetap saja dipaksa mengungsi ke Timor Barat oleh para pemimpin UDT, termasuk F36. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa ia dan keluarganya mengungsi di Timor Barat selama kira-kira setahun, dan pada masa pengungsian tersebut saudara laki-lakinya meninggal akibat kurangnya makanan yang layak.⁴⁴

41. Penduduk Desa Saburai (Maliana, Bobonaro) mengatakan kepada Komisi bahwa bukan hanya pendukung Fretilin yang dipaksa melintasi perbatasan:

*Pada 30 Agustus 1975 pertempuran antara para pendukung UDT dan Fretilin dimulai. Tentara dari Skuadron Kavaleri 5 di Bobonaro masuk ke Maliana. Para pendukung UDT dan Apodeti, dipaksa oleh F40 seorang Timor-Leste anggota partai Apodeti dan liurai setempat, F36, untuk lari ke Timor Barat. Sekitar 500 orang dari aldeia Mesege menjadi pengungsi di Tahon (Timor Barat) selama setahun.**

* Profil Komunitas CAVR, Suco Saburai (Maliana, Bobonaro). Pernyataan-pernyataan lain yang diterima Komisi ada yang mengatakan bahwa F36 terlibat dalam memaksa penduduk melintasi perbatasan ke Timor Barat pada saat itu, termasuk pernyataan HRVD 02487, 02449, 02491, 02462, dan 02446. F36 pernah menjabat sebagai bupati di Distrik Bobonaro dari 1992 sampai 1999. Pada 1999, dia memainkan peran penting dalam pembentukan dan dukungan untuk kelompok milisi, dan paling tidak ada sembilan kelompok milisi di distriknya. (Lihat Submisi Kantor Komisi Hak Asasi Manusia, hal. 114 dan 142-3.)

Jumlah pengungsi di Timor Barat

42. Komisi tidak dapat menentukan secara pasti jumlah pengungsi di Timor Barat pada 1975. Akan tetapi, berbagai sumber orang Timor-Leste yang pernah menjadi penghuni kamp-kamp di Timor Barat sepakat bahwa angka 40.000 yang diberikan oleh pemerintah Indonesia merupakan perkiraan yang sangat berlebihan. João Carrascalão mengatakan kepada Komisi:

[Di sana] tidak pernah ada lebih dari 10.000 (pengungsi). Pada waktu itu saya protes keras kepada pemerintah Indonesia karena mereka menggunakan angka 40.000 orang dan mereka menerima bantuan untuk 40.000 orang. (Tetapi) orang-orang Timor tidak mendapatkan apa-apa. Mereka [pihak berwenang Indonesia] mengambil untung dari keadaan itu.⁴⁵

43. Dua orang pastor, Pastor Francisco Fernandes⁴ dan Pastor Apolinario Guterres, yang bergabung dalam pelarian ke Timor Barat pada Agustus - September 1975 dan terlibat dalam kerja Komite Pengungsi Timor-Leste di Atambua pada masa itu, menyebutkan jumlah pengungsi “sekitar 20.000”.⁴⁶

44. Salah seorang pemimpin partai KOTA, José Martins “membelot” dari pihak pro-integrasi ketika sedang berada di Roma pada 1976. Dari Roma ia menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Kurt Waldheim, bertanggal 29 April 1976, dan di dalamnya ia mengatakan bahwa jumlah pengungsi tidak lebih daripada 20.000. Sama seperti João Carrascalão, ia mengklaim bahwa angka 40.000 yang disebut oleh pemerintah Indonesia digunakan “sebagai senjata politik melawan Fretilin” dan “permainan untuk memperoleh dana dan bantuan dari Palang Merah Internasional dan pemerintah-pemerintah asing”. Tomás Gonçalves dari Apodeti, yang juga berada di Timor Barat pada waktu itu, mengatakan kepada Komisi bahwa jumlah pengungsi tidak lebih daripada 25.000-30.000.⁴⁷ Bahkan Francisco Lopes da Cruz, yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil ketua Pemerintahan Sementara Timor Timur bentukan Indonesia, mengatakan pada Maret 1976 bahwa tidak lebih daripada 30.000 pengungsi melarikan diri dari Timor-Leste akibat perang saudara.⁴⁸

45. Namun demikian, lembaga-lembaga internasional yang beroperasi di Timor Barat menerima angka yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Pada 16 September 1975, satu laporan ICRC memperkirakan jumlah pengungsi antara 25.000 dan 50.000.⁴⁹ Utusan ICRC, Michel Testuz, melaporkan telah mengunjungi 10.000 pengungsi di kamp pengungsi di Haekesak dan 6.000 pengungsi di Builalu pada 29 September 1975. Selanjutnya ia melaporkan bahwa imigrasi perbatasan Indonesia mengklaim bahwa sampai dengan 16 September 1975 sebanyak 33.000 orang telah melintasi perbatasan dan 2.000-3.000 orang melintasi perbatasan ketika pecah pertempuran di Batugade pada 24 September 1975. Dengan menggunakan data

* Pastor Francisco Fernandes, ketika Laporan ini ditulis, telah meninggal dunia di Makau, Cina, pada 30 Agustus 2005 dan dikuburkan di Subdistrik Laçlo, Distrik Manatuto, Timor-Leste, pada 11 September 2005.

tersebut Testuz menyimpulkan bahwa “jumlah seluruh pengungsi saat ini adalah 40.000 dan dapat meningkat hingga mencapai 50.000 pengungsi”.⁵⁰ Angka 40.000 pengungsi juga digunakan dalam satu laporan Catholic Relief Services (CRS) yang menguraikan bantuan kemanusiaan untuk Timor Barat pada November 1975.⁵¹

Kondisi dan bantuan kemanusiaan di Timor Barat

46. Begitu program-program bantuan internasional mulai diberikan untuk para pengungsi, berbagai laporan mengatakan bahwa kebutuhan dasar mereka untuk sementara tercukupi. Namun beberapa sumber mengatakan bahwa kondisi di kamp-kamp tersebut selanjutnya memburuk.

47. Utusan ICRC, Michel Testuz, menggambarkan situasi pada Oktober 1975 dengan mengatakan bahwa kamp-kamp pengungsi bersifat sementara tetapi persediaannya baik. Sebagian besar pengungsi ditampung di sekolah-sekolah yang telah ditutup oleh pihak berwenang Indonesia untuk mengakomodasi mereka. Meskipun tekanan dari masyarakat setempat untuk membuka kembali sekolah-sekolah dan memindahkan pengungsi semakin meningkat, ia menyebutkan bahwa “pemerintah tidak mengambil tindakan atau membuat rencana apapun untuk pemindahan dan memberi kesan bahwa semuanya akan berakhir besok dan para pengungsi akan pulang dengan aman hari selanjutnya”. Utusan ICRC itu selanjutnya mengemukakan bahwa Palang Merah Indonesia mengurus para pengungsi di sana dengan baik, membagikan jatah beras dan uang senilai 25 sen dolar Amerika Serikat sehari untuk kebutuhan lainnya.⁵² Para pengungsi terlihat “makan dengan baik dan sehat”.⁵³ Penilaian ini dibenarkan oleh para mantan pengungsi di kamp tersebut yang telah diwawancarai oleh Komisi.⁵⁴ Mereka mengatakan bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah provinsi setempat dan Palang Merah Indonesia mencakup penyediaan rumah setengah permanen dengan sanitasi yang memadai. Selain mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari, pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai kegiatan sosial seperti pelajaran bahasa Indonesia.

48. Meskipun demikian, sejumlah mantan penghuni kamp-kamp tersebut mengatakan bahwa setelah periode awal mereka dilayani dengan baik, sikap Indonesia kepada mereka berubah.⁵⁵ Emiliano (Rui) Lopes mengatakan kepada Komisi:

Banyak orang melarikan diri ke luar negeri, karena mereka tidak menyukai sikap militer. Misalnya seorang Hansip juga bisa menyuruh-nyuruh, memukul kami. Semua melihat ini dan banyak orang pergi... Ada orang yang mati karena sakit, tetapi tidak ada yang mati kelaparan. Saya bicara jujur. Tetapi tekanan mental sangat tinggi... Kami merasa betul-betul tertindas. Tidak banyak yang bisa kami lakukan. Jika seseorang mulai memukul, kami hanya melihat dan diam saja. Di mana harga diri kita? Hal-hal seperti ini membuat keluarga Carrascalão dan keluarga-keluarga lainnya melarikan diri ke luar negeri.⁵⁶

49. Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB Kurt Waldheim, José Martins mengeluh bahwa para pengungsi “hanya menemukan perlakuan buruk dan kesengsaraan”:

Para pengungsi dipaksa mengikuti latihan militer dan bertempur melawan Fretilin atau bekerja tanpa dibayar untuk orang-orang Indonesia. Harta benda mereka disita, seperti uang, perhiasan, dan lain-lain.⁵⁷

50. Dalam kesaksian mereka kepada Komite Dekolonisasi pada Oktober 1979, Pastor Francisco Fernandes dan Pastor Apolinario Guterres memberikan gambaran yang terperinci mengenai perubahan sikap Indonesia kepada pengungsi. Mereka mengatakan bahwa hal itu terjadi pada Maret 1976 ketika pemerintah Indonesia meminta kedua pastor Katolik tersebut memastikan semua pengungsi menghadiri rapat umum yang akan dihadiri Menteri Luar Negeri Adam Malik. Para pengungsi diharuskan membawa bendera Indonesia dan menyerukan integrasi. Setelah hanya 2.000 dari 20.000 pengungsi menghadiri rapat umum tersebut, pembagian makanan dikurangi dan kemudian dihentikan samasekali. Satu-satunya pilihan mereka adalah menjual barang milik mereka dengan harga yang sangat murah, “melakukan kerja berat untuk imbalan upah yang rendahnya melanggar ketentuan,” atau masuk dinas militer.⁵⁸

51. Beberapa mantan pengungsi membenarkan bahwa kekurangan makanan yang layak membuat mereka terpaksa bergabung dengan militer di Timor Barat. Dalam pernyataannya kepada Komisi, Emiliano (Rui) Lopes mengatakan bahwa pada awalnya para pengungsi di kamp-kamp di Timor Barat tidak mengalami kekurangan apapun. Namun jumlah bantuan yang diterima oleh para pengungsi mulai menipis begitu semua bantuan internasional dibagikan oleh para pejabat Indonesia. Menurutnya, sejumlah pemuda bergabung dengan pasukan Partisan supaya dapat menerima jatah:

*Salah satu alasan saya angkat senjata di perbatasan adalah karena tidak ada lagi makanan untuk dimakan, dan saya terpaksa melakukannya agar mendapatkan makanan. Karena setiap sumbangan dari organisasi nonpemerintah internasional diberikan melalui pemerintah Indonesia. Pada awalnya mereka [Indonesia] menyediakan cukup bantuan, tetapi dengan berlalunya waktu bantuan mulai menurun. Sehingga saya terpaksa angkat senjata untuk mendapatkan lebih banyak makanan, kalau tidak kami akan menghadapi kesulitan.*⁵⁹

52. Odete dos Santos dari Memo (Maliana, Bobonaro) mengisahkan kepada Komisi mengenai perekrutan sebagai TBO (tenaga bantuan operasi) dua orang anggota keluarganya yang dipindah paksa, dan konsekuensinya. Pada 1975 keluarganya dipindahkan secara paksa ke Atambua oleh F36. Di Atambua dua anggota keluarganya, Lesu Bere dan Alfredo Lopes, dipaksa menjadi TBO. Mereka diharuskan mengikuti operasi-operasi militer di Timor-Leste. Menurut Odete, Lesu Bere dibunuh oleh tentara Indonesia di Atsabe, dan Alfredo Lopes di Maliana.⁶⁰

Kekurangan bahan makanan dan bantuan kemanusiaan di Timor-Leste

53. Keadaan orang-orang yang lari dari kekerasan tetapi tetap berada dalam wilayah Timor-Leste sangat sulit dinilai. Banyak orang lari ke tempat-tempat terpencil dan terisolasi dari orang luar yang dapat memberikan bantuan atau bertindak sebagai pengamat yang tidak memihak.

54. Surat-menyurat ICRC menegaskan bahwa, selain hilangnya akses pada tanaman pertanian mereka sendiri, isolasi adalah sebab utama mengapa orang-orang yang berpindah secara internal menghadapi ketidakpastian bahan makanan. Utusan ICRC mencatat bahwa sebagian besar penduduk sudah menjalani hidup di batas bertahan hidup.⁶¹ Seperti telah dicatat sebelumnya, ia memperkirakan bahwa 50% penduduk berpindah karena konflik tersebut.⁶² Namun demikian, ia berpendapat bahwa tidak terjadi “kelaparan” setelah perang sipil, yang terjadi hanya “krisis makanan”. ICRC diberi kebebasan akses oleh Fretilin, yang sadar bahwa situasi pangan akan menjadi gawat jika kapal tidak diizinkan mendarat dan memasok persediaan.

55. ICRC membatasi kegiatan distribusi makanannya ke Dili dan segitiga Ermera-Maubara-Dili. Utusan ICRC mengakui bahwa ini berarti bahwa distribusinya tidak begitu ditentukan oleh kebutuhan—meskipun daerah-daerah yang memperoleh pembagian makanan adalah daerah-daerah yang mengalami kekerasan dan pemindahan—tetapi lebih ditentukan oleh keinginan mereka untuk menghindari terlihat berpihak secara politis. ICRC menolak memberikan makanan ke daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Fretilin dengan alasan bahwa bantuan semacam itu akan “bersifat politis”.⁶³ Fretilin menangani pembagian ke bagian tengah negeri, dengan menggunakan bantuan dari Australian Council for Overseas Aid (ACFOA – Dewan Australia untuk Bantuan Luar Negeri).⁶⁴ Tetapi pengiriman makanan ICRC belum mulai dilakukan hingga akhir November dan dengan demikian baru saja dimulai ketika ICRC dipaksa keluar dari Timor-Leste pada awal Desember, tidak lama sebelum invasi skala penuh Indonesia.

Kelaparan dan kematian

56. Meskipun ada bantuan kemanusiaan ini, Komisi menerima berbagai laporan mengenai kelaparan dan kematian akibat kekurangan bahan makanan dan obat-obatan. Orang-orang yang pindah ke pergunungan pedalaman, khususnya, memiliki akses buruk kepada bantuan dari luar. Berikut ini adalah beberapa contoh kesaksian yang diterima oleh Komisi.

57. Veronica dos Santos dari Lacro (Manatuto) mengatakan kepada Komisi bagaimana pada 1975 keluarganya lari dari para pendukung Apodeti dan bersembunyi di hutan Zona Modok. Ia menyebut lima anggota keluarganya yang meninggal akibat kekurangan makanan dan perawatan medis:

Di tempat kami mengungsi, saya kehilangan beberapa anggota keluarga—João da Costa, José Luis dos Santos, Domingas dos Santos, Carlos do Rosario Cabral, Maria de Fátima Canossa, dan Filomeno Cabral—karena kekurangan makanan dan obat-obatan.⁶⁵

58. Komisi mendengar satu kasus di Soibada (Manatuto) ketika konflik antarpartis politik membuat penduduk lari ke hutan. Atas perintah Fretilin penduduk pindah ke satu tempat bernama Wetirak Modok (Natarbora, Manatuto).⁶⁶

59. José Nunes de Andrade mengisahkan bahwa ia diserang oleh anggota-anggota UDT di desanya, Mahakidan (Alas, Manufahi), pada 1975, ketika ia dan empat orang temannya sedang berusaha mengibarkan bendera Fretilin. Mereka berlari ke Wederok, kemudian anggota keluarganya yang lain bergabung dengannya. Dua anggota keluarganya meninggal akibat kekurangan makanan dan penyakit ketika mereka berada di Wederok.⁶⁷

60. Sejumlah pembunuhan terjadi ketika orang-orang pergi mencari makanan. Komisi mendapatkan kesaksian mengenai kasus-kasus di mana konflik antarpartis menyebabkan penduduk berpindah secara internal, dan dalam beberapa kasus dibunuh oleh pasukan Fretilin.⁶⁸

61. Laporan-laporan mengenai kelaparan dalam periode ini sangat sedikit. Penilaian umum ICRC menyebutkan bahwa kematian yang terkait dengan kelaparan dan kekurangan makanan bukanlah suatu gejala luas sebelum terjadinya invasi Indonesia. Karena kekerasan cepat surut (Fretilin berhasil menguasai seluruh wilayah Timor-Leste dalam beberapa minggu), kebanyakan orang yang pindah secara internal bersembunyi paling lama satu bulan. Sampai pertengahan September 1975, kebanyakan dari mereka sudah kembali ke rumah masing-masing dan mulai bercocok tanam lagi.⁶⁹

Pemindahan dan kelaparan selama pendudukan Indonesia (1975-1979)

Invasi, pemindahan, dan evakuasi 1975-1977

62. Invasi skala penuh Indonesia terhadap Timor-Leste pada 7 Desember 1975 menandai dimulainya perpindahan penduduk Timor-Leste dalam skala besar. Invasi atas kota Dili pada hari itu juga mengakibatkan banyak penduduk mengungsi ke wilayah perdesaan, mengikuti mereka yang telah terlebih dahulu meninggalkan kota sebelum terjadi serangan. Pergerakan seperti itu terulang di luar kota Dili, baik sebagai tanggapan terhadap kehadiran nyata pasukan Indonesia maupun karena perkiraan bahwa mereka akan segera tiba.

63. Sebagian evakuasi terjadi secara spontan, yang lainnya diatur oleh gerakan resistansi yang dipimpin oleh Fretilin. Dalam keadaan yang rumit ini, banyak orang Timor-Leste yang meninggalkan kampung halaman tiba-tiba mendapati diri mereka terperangkap antara ketakutan harus hidup di bawah kekuasaan militer Indonesia yang kejam dan gerakan Resistansi yang teguh berusaha menjauhkan mereka dari penguasaan oleh tentara Indonesia. Motivasi Resistansi tampaknya adalah gabungan antara tekad untuk mendukung dan melindungi rakyat, untuk memenuhi kebutuhan keamanan Resistansi itu sendiri di masa perang, dan keinginan untuk tetap memegang kendali atas sebagian besar penduduk supaya bisa meluncurkan program sosial revolusionernya, dan sebagai bukti mengenai tingginya dukungan politik yang diperolehnya.

64. Jumlah orang yang pindah pada masa dua tahun pertama pendudukan mustahil diperkirakan, tetapi yang jelas jumlah tersebut meningkat selama waktu tersebut. Perpindahan akhir sekitar 300.000 orang ke dalam wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia selama tahun 1978-1979 adalah petunjuk terbaik mengenai skala pengungsian besar-besaran yang dimulai pada akhir 1975.

Evakuasi dan pengungsian setelah invasi besar-besaran

65. Meskipun invasi Indonesia atas Dili pada 7 Desember 1975 sudah diduga akan terjadi, tetap saja banyak yang tidak siap menghadapinya. Keadaan menjadi kacau-balau ketika orang-orang melarikan diri ke segala arah. Banyak yang terpisah dari sanak keluarga terdekat mereka. Belinda Lopes bercerita kepada Komisi:

Tanggal 7 Desember 1975 saya di Quintal Boot. Ketika pasukan Indonesia melakukan invasi, mereka langsung ke rumah kami dan menembak saudara laki-laki saya, Raul dan Kaimauk, tepat di depan saya... Penduduk Quintal Boot semua sudah lari ke gunung. Saya dan sepupu saya memilih tinggal di rumah. Tetapi karena keadaan makin kacau kami berdua lari ke Tereiro, lalu [kami] pindah ke Rumah sakit Lahane. Kami tinggal di Lahane selama dua hari. Kami sangat lapar karena kami tidak punya apa-apa untuk dimakan. Akhirnya kami berdua kembali ke rumah untuk ambil beras dan makanan lain. Keluarga saya yang lain terpencar-pencar ... Saya tidak tahu mereka lari ke mana.⁷⁰

66. Begitu berita mengenai invasi tersebut mencapai tempat-tempat lain di Timor-Leste dan pasukan Indonesia mulai bergerak keluar dari Dili, lebih banyak lagi orang yang lari ketakutan. Di Baucau, pasukan Indonesia tiba hanya beberapa hari sesudah invasi di Dili. Penduduk Ualili (Baucau Kota, Baucau) mengisahkan kembali kepada Komisi:

Pada 9 Desember 1975 tentara Indonesia masuk ke kota Baucau. Mereka menyebarkan poster dalam bahasa Tetum yang bertuliskan : “Ami se ba passa Natal iha Baucau toò iha Tutuala” (Kami akan

merayakan Hari Natal dari Baucau sampai Tutuala). Sehari setelah kejadian ini penduduk Uailili [kira-kira 10 km dari pusat Kota Baucau] lari terpecah-pecah. Sebagian orang lari ke hutan, sementara yang lainnya bersembunyi di kebun kelapa dekat rumah kami hingga tentara Indonesia datang.⁷¹

67. Bagi sejumlah komunitas, berita mengenai invasi Indonesia di Dili sudah cukup membuat mereka pergi meninggalkan rumah dan menyelamatkan diri ke gunung-gunung. Manuel Carceres da Costa mengungkapkan kepada Komisi mengenai tanggapan komunitas di Laçlo (Manatuto):

Setelah militer Indonesia menyerbu Dili tanggal 7 Desember 1975, tetapi sebelum Natal, ada orang-orang dari Dili yang kembali ke Laçlo. Mereka memberitahu kami: "Militer Indonesia telah memasuki Dili dan membunuh banyak orang. Mereka menembak mati orang-orang dan menggunakan tank-tank untuk mengambil semua milik penduduk." Kami mendengar informasi ini dan berpikir: "Daripada... tinggal di sini dan membiarkan musuh menghancurkan kita, lebih baik... lari ke hutan." Kami juga berharap bantuan dari dunia luar cepat datang.⁷²

68. Di tempat-tempat lain, Fretilin telah membuat persiapan untuk mengungsikan penduduk dalam bulan-bulan sebelum invasi dan telah mengosongkan desa-desa sebelum kedatangan pasukan Indonesia di wilayah tersebut. Tingkat pengorganisasian ini tampaknya paling umum di distrik-distrik bagian timur Baucau dan Lautém, misalnya di wilayah Tutuala, Iliomar, Uaitame, Alawa Kraik, dan Ossuhuna.

69. Sejumlah penduduk Kota Ermera melarikan diri ke gunung-gunung pada awal 1976, saat mereka mendengar pasukan Indonesia telah memasuki Letefoho melalui Bobonaro. Francisco Bernardino Soares menuturkan kepada Komisi:

Kami mendengar suara pesawat-pesawat mengebom daerah Letefoho selama satu hari penuh. Situasi di Ermera tidak terkendali lagi. Tentara Resistansi berusaha menghentikan tentara Indonesia di Dauhati, untuk menghalangi mereka masuk Ermera. Kami mengungsi ke Mau-Ubu, yakni tanah tradisional kami tempat kebun dan uma lulik [rumah keramat]. Kami lari karena kami dengar bahwa "bapak-bapak" [tentara Indonesia] telah memasuki Letefoho dan membunuh orang sembarangan. Kami tak pernah bayangkan bahwa kami akan menghadapi bencana orang-orang yang mati kelaparan. Selama dua tahun kami hidup cukup baik. Ketika kami meninggalkan Ermera, kami 11 orang, ditambah 20 anggota keluarga lain yang tinggal di Mau-Ubu. Jumlah kami semua lebih dari 30 orang. Ketika kami kembali ke Ermera, hanya tiga orang dari kami yang tersisa. Istri dan keluarga saya semua mati di hutan karena sakit dan kelaparan.⁷³

70. Di tempat lain, orang-orang menuturkan bahwa mereka masih bisa tinggal di desa mereka di pedalaman sampai tibanya militer Indonesia pada akhir 1976 atau awal 1977.⁷⁴

Ditangkap atau menyerah

71. Sejumlah komunitas ditangkap sebelum sempat melarikan diri. Lainnya memilih untuk tetap tinggal dan berhadapan dengan pasukan pendudukan Indonesia.

72. Di Suai (Covalima) sejumlah orang tidak menyingkir ke pergunungan saat pasukan Indonesia melakukan serangan. Mereka bersembunyi di kebun-kebun dan kemudian menyerahkan diri.⁷⁵

73. Begitu pula, sejumlah orang di Same (Manufahi) yang tidak mengikuti pemimpin Fretilin langsung menyerahkan diri kepada pasukan Indonesia sewaktu mereka memasuki kota pada Juni 1976.⁷⁶

74. Ketika tentara Indonesia menyerang Desa Coliate Leotelo (Hatolia, Ermera) pada Mei 1976, sekitar 200 orang tidak dapat mengungsi karena tentara Indonesia memblokir wilayah tersebut. Pada awalnya mereka ditahan di Desa Coliate Leotelo, kemudian mereka diharuskan pindah ke Letefoho (Ermera).⁷⁷

Keretakan dalam tubuh Fretilin dan kebijakan mengenai penduduk sipil

75. Tidak lama sesudah invasi, dalam jajaran pemimpin Fretilin terjadi perbedaan pandangan yang serius perihal implikasi kebijakan mereka pada penduduk sipil yang ditegaskan dalam rapat Komite Sentral pada Mei 1976. Karena berbagai sebab, termasuk politis, militer, kemanusiaan, dan keagamaan, para penentang menolak strategi untuk menciptakan zona bebas (zonas libertadas) di mana penduduk sipil akan memberikan dukungan kepada perjuangan bersenjata sekaligus melakukan transformasi politik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan revolusioner Fretilin. Mereka cenderung menerapkan strategi militer murni, yang tidak bergantung pada basis dukungan penduduk sipil dan karena itu akan memperbolehkan penduduk sipil turun dari gunung-gunung dan menyerah. Tentangan seperti ini datang dari berbagai pihak, termasuk tentara profesional yang dulunya berdinis dalam tentara kolonial Portugis, pemimpin tradisional, dan beberapa orang dalam jajaran pemimpin Fretilin sendiri. Pendukung awal yang paling terkenal pandangan ini adalah Aquiles Freitas, seorang mantan sersan pada tentara Portugis dan pemimpin tradisional dari Quelicai (Baucau), yang ditunjuk menjadi wakil komandan Sektor Centro Leste. Atas perintah pemimpin Fretilin, Aquiles Freitas akhirnya ditangkap bersama sejumlah pengikutnya dan dieksekusi (lihat Bab 7.2 Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Meskipun demikian, pandangan ini banyak mendapat dukungan dan terus ada.

76. Pemimpin-pemimpin masyarakat menyampaikan kepada Komisi dampak dari konflik keras ini pada desa-desa di wilayah Subdistrik Lautém pada 1976. Mereka ingat bahwa saat komisaris politik untuk Sektor Ponta Leste, Juvenal Inácio (Sera Key), dan *Adjunto* Fernando Txay menyuarkan garis kebijakan partai agar penduduk sipil mengungsi ke gunung-gunung bersama Fretilin, Francisco Hornay menentang mereka. Seperti temannya, Aquiles Freitas, Francisco Hornay adalah mantan sersan dalam tentara kolonial Portugis yang bergabung dengan Falintil. Konflik tersebut mengawali rangkaian kekerasan yang dilakukan kedua belah pihak yang berakhir dengan eksekusi Francisco Hornay dan 14 pengikutnya, serta penahanan dan penyiksaan atas banyak orang lainnya.

Tanggung jawab pihak-pihak yang berkonflik

77. Konvensi-Konvensi Jenewa secara jelas menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus menjamin kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup penduduk sipil yang terperangkap dalam konflik.*

78. Komisi menerima bukti yang sangat banyak bahwa angkatan bersenjata Indonesia memberikan prioritas mutlak pada pertimbangan keamanan dan hampir tidak memberikan perhatian bagi perlindungan dan kesejahteraan warga sipil. Dengan berbuat demikian, Indonesia gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi kehidupan penduduk sipil.

79. Iliomar adalah salah satu contoh. Pada 1975 Fernando Amaral adalah kepala Desa Fuat di pinggiran Kota Iliomar (Iliomar, Lautém). Ia menuturkan kepada Komisi:

Invasi Indonesia pertama masuk Lospalos pada [Februari] 1976. Kami di Iliomar tidak mengalami apa-apa [perang] hingga 9 Februari 1977 saat kami mulai mendengar tembakan mortir dan suara meriam dari kapal-kapal. Kami menjadi takut dan kuatir dan ... kami mengungsi ke hutan di sekitar Fuat dan ke tempat-tempat lain di dekat rumah kami. Kami bersembunyi selama beberapa bulan di Fuat lalu pindah ke Luro. Kami pindah ke hutan karena kami takut militer Indonesia. Tak ada yang memaksa kami.⁷⁸

80. Sering pemimpin Fretilin setempat mengorganisasi pengungsian untuk menjauhkan penduduk dari marabahaya. Evakuasi ini merupakan bagian dari kebijakan Fretilin untuk mempersiapkan penduduk melancarkan resistansi nasional yang terorganisasi. Di Baucau, misalnya, Fretilin memindahkan banyak orang ke lereng-lereng Gunung Matebian pada awal Februari 1976. Mário (Marito) Nicolau dos Reis adalah pemimpin Fretilin di Baucau pada saat terjadinya invasi. Ia mengungkapkan kepada Komisi perdebatan internal Fretilin mengenai perlu atau tidaknya mengevakuasi penduduk sipil:

* Lihat Konvensi Jenewa (IV) mengenai Perlindungan untuk Penduduk Sipil di dalam masa perang, Jenewa, 12 Agustus 1949, untuk uraian lengkap mengenai kewajiban pihak-pihak yang berkonflik.

[Tahun 1975] ada diskusi antaranggota Komite Sentral Fretilin. Sebagian mengatakan, "Kalau mungkin kita mengambil contoh dari negara lain: orang-orang tua dan anak-anak tidak perlu ke hutan, kita harus memperhatikan kebutuhan ekonomi dan kesehatan mereka. Kita tidak mempunyai sarana untuk semua orang." Tetapi ada yang mengatakan seperti ini: "Jika masyarakat ini tidak kita persiapkan secara politik, moral, dan mental, dapat dikatakan bahwa kita tidak memiliki legitimasi untuk mempertahankan tugas kita sebagai satu partai yang besar di seluruh Timor." Fretilin mengatakan bahwa semua orang [harus] mengungsi. Sesudah semuanya dipersiapkan, baru mereka boleh turun [untuk menyerah]. Karena itu Fretilin harus memaksa, maaf saya memakai kata "memaksa", masyarakat mengungsi ke gunung.⁷⁹

81. Ketika penduduk Defawasi (Bagaia, Baucau) mulai mengungsi menuju Gunung Matebian pada September 1976, hal itu dilakukan atas perintah Fretilin. Pada Oktober 2003, mereka mengisahkan hal tersebut kepada Komisi:

Tidak terlalu represif. Evakuasi merupakan keharusan yang penting bagi keselamatan nyawa dan juga untuk menunjukkan kesetiaan kami pada frente armada [Falintil] dan Komite Sentral Fretilin.⁸⁰

82. Komisi juga menerima keterangan mengenai pengungsian yang represif. Penduduk Caisido (Baucau, Baucau) mengisahkan pengalaman mereka:

Bulan Februari - Maret 1976 Fretilin mulai memaksa rakyat supaya mengungsi, pertama-tama ke Uai-Ae dan Bundura, lalu ke Hae-Osso, Vemasse. Ketika para pengungsi di Hae-Osso, pasukan Fretilin membunuh dua orang, Francisco Belo dan Eduardo Belo, karena mereka dicurigai atau karena balas dendam. Lalu mereka membunuh lima orang simpatisan Apodeti. Kemudian Fretilin memaksa penduduk mengungsi ke Lobito.⁸¹

83. Sering penduduk tidak punya kesempatan mengungsi, atau mereka memutuskan tidak pergi. Ini paling umum terjadi di kota-kota.

84. Warga Bidau Santana dan Meti-Aut di Cristo Rei, Dili, menuturkan kepada Komisi:

Pada tanggal 7 Desember pasukan terjun payung Indonesia mendarat di Bidau Santana dan Meti-Aut, dan di seluruh Dili. Kami berpencar ketakutan. Sebagian tinggal di rumah, sebagian lari ke hutan dan tak pernah kembali. Chiquito Mau-Lohi [dari Apodeti] meyakinkan orang-orang untuk tidak pergi ke hutan, dan mengatakan bahwa jika mereka semua mati di sana "Siapa yang akan bertanggung jawab di kemudian hari?"⁸²

85. Di Buruma, di pinggir timur kota Baucau, sejumlah orang, terutama yang aktif di Fretilin, berusaha mengungsi begitu tank-tank pasukan Indonesia memasuki kota tersebut pada 10 Desember. Sebagian di antara mereka tertangkap. Salah seorang yang tertangkap adalah aktivis Fretilin bernama Manuel Fernandes, dibunuh pada 18 Desember. Bagi yang tinggal di Buruma, kehidupan sulit. Pada Januari 1976 Batalion 330 ditempatkan di desa tersebut dan dua orang yang dicurigai berhubungan dengan Fretilin tewas dibunuh. Penduduk Buruma kemudian dikumpulkan di pusat desa dan mereka dibatasi ruang geraknya keluar dari wilayah tersebut.⁸³

86. Pasukan Indonesia menyerang Desa Samara (Hatolia, Ermera) pada 24 April 1976. Pasukan Fretilin berusaha mempertahankan desa tersebut, tetapi tentara Indonesia mengalahkan mereka dan 500 orang penduduk sipil Samara diangkut ke ibukota Distrik Ermera. Di Ermera, penduduk Samara tidak diizinkan keluar meninggalkan kota, dan mereka menderita kelaparan yang parah.⁸⁴

87. Masyarakat Subdistrik Hato Udo (Ainaro) menyampaikan kepada Komisi pengalaman mereka menyerah pada awal 1976. Pada 1975, penduduk Hato Udo berjumlah sekitar 3.000 orang, namun hanya ada 40 pucuk senjata untuk mempertahankan diri. Para pemuka Hato Udo mengadakan rapat pada 28 Februari 1976 dan memutuskan menyerah kepada pasukan tentara Indonesia pada hari itu juga, tanpa mengadakan perlawanan. Tetapi keputusan untuk menyerah juga menghasilkan kesulitan. Awalnya, mereka memiliki cukup makanan, akan tetapi setelah beberapa lama, mereka mulai menderita kelaparan. Batalion 312 tentara Indonesia yang menguasai kota, bersama Hansip dan anggota-anggota partai Apodeti, telah membantai semua binatang ternak dan membakar sebagian hasil panen. Penduduk tidak diizinkan meninggalkan desa untuk bertani. Angkatan bersenjata Indonesia juga membawa ke Hato Udo banyak orang yang menyerah di tempat lain. Orang-orang ini juga membutuhkan makanan dan hal ini semakin menguras persediaan bahan makanan yang sudah begitu sedikit.⁸⁵

Pengungsian, kelaparan, dan kematian di Bobonaro

88. Dalam satu wawancara dengan petugas Komisi, Suster Consuela Martinez dari Ordo Carmelita mengisahkan pengalaman menyerah kepada tentara Indonesia.⁸⁶ Karena ruang gerak mereka dibatasi, kekurangan makan selalu menjadi masalah yang dihadapi penduduk setempat selama tiga tahun berikutnya. Kesaksian Suster Consuela Martinez sangat memilukan karena mengungkapkan keadaan yang sangat menyedihkan yang dihadapakan pada orang-orang yang menyerah oleh pihak berwenang Indonesia. Keadaan ini menyebabkan kelaparan dan penyakit, sehingga banyak orang meninggal dunia, khususnya anak-anak. Kesaksian ini memperlihatkan pola pengabaian terhadap penduduk sipil yang menyerah, yang menyebabkan kematian dalam jumlah sangat besar pada akhir dasawarsa 1970-an, yang merupakan pola yang telah dimulai pada masa awal setelah invasi (lihat Boks: Bobonaro menyerah, di bawah).

Bobonaro menyerah⁸⁷

Suster Consuela Martinez dari Ordo Carmelita memberikan wawancara yang terperinci kepada Komisi mengenai serangan-serangan tentara Indonesia pada 1975 di distrik perbatasan Bobonaro, yang mengakibatkan pengungsian besar-besaran. Ia berbicara tentang sulitnya hidup di pergunungan dan tentang keadaan yang sangat buruk setelah menyerah kepada tentara Indonesia, yang menyebabkan kematian penduduk sipil dalam skala besar. Studi ringkas ini berdasarkan wawancara dengan Suster Consuela.

Suster Consuela tinggal di Kota Bobonaro bersama tiga biarawati lainnya pada Agustus 1975 saat ia menyaksikan pesawat terbang militer Indonesia menjatuhkan bom di atas kota. Waktu itu sekitar terjadinya “upaya kudeta” UDT di Dili. Ia mendengar bahwa pesawat-pesawat terbang juga mengebom Kota Maliana dan Suai. Setiap hari pesawat-pesawat itu menjatuhkan bom. Banyak orang mati. Ia mengatakan bahwa ketika penduduk mendengar pesawat-pesawat terbang datang untuk menjatuhkan bom, mereka lari bersembunyi.

Suster Consuela menuturkan bahwa seorang anak katekis yang dikenalnya tewas terbunuh oleh bom yang meledak di dekatnya. Ia ingat bahwa di pasar Bobonaro orang-orang terkena serpihan-serpihan yang beterbangan akibat sebuah serangan. Saat itu ia berpikir bahwa bom-bom itu tidak diarahkan ke rumah-rumah di kota melainkan ke tanah-tanah lapang. Rumah-rumah di dekat wilayah ini hancur-lebur. Para biarawati itu dan semua orang menjadi sangat takut. Ia berusaha membuat tempat perlindungan di dapur dari kasur-kasur.

Pada Desember 1975 ketika pasukan tentara Indonesia mendarat di Dili, orang-orang melarikan diri ke gunung-gunung di Ai Metan. Keempat biarawati pergi bersama mereka dengan seorang pastor orang Timor-Leste bernama António Maia. Orang-orang berhasil membawa makanan dan mempertahankan hidup dengan apa saja yang dapat mereka temukan. “Kami hanya memakan pisang atau kacang tanah setiap hari. Kalau ada jagung, mereka makan jagung. Tuhan memberkati kami, sehingga tidak ada yang sakit,” katanya.

Suster Consuela mengatakan bahwa masyarakat tidak pernah mengambil keputusan bersama untuk mengungsi; ini terjadi secara spontan. Seluruhnya ada sekitar 8.000 orang di Ai Metan—yang berasal tidak hanya dari kota terdekat Bobonaro, tetapi juga dari tempat-tempat seperti Hauba (Maliana, Bobonaro) dan Cailaco (Atabae, Bobonaro) di subdistrik-subdistrik lainnya dalam wilayah Distrik Bobonaro dan dari Marobo di Railaco (Ermera). Di pergunungan mereka hidup di

alam terbuka dalam cuaca dingin. Mereka membangun gubuk-gubuk sederhana dari rumput dan bahan lain yang bisa mereka temukan. Tidak ada organisasi atau proses pengambilan keputusan oleh masyarakat. Orang-orang umumnya berkelompok dalam keluarga-keluarga. Sekitar 300 orang tinggal bersama empat biarawati dan pastor tersebut, berharap dapat lebih aman bersama mereka.

Sekitar 15 anggota Falintil bersembunyi bersama orang-orang ini, termasuk Manuel Barros, anak *liurai* Hauba (yang kemudian terbunuh di Maliana). Ayahnya, sang *liurai*, melarangnya membawa senjata.

Pada pagi hari 2 Februari 1976, seorang prajurit Indonesia yang tidak membawa senjata, ditemani seorang Timor-Leste anggota Partisan dari Atabae, datang menemui mereka di pergunungan. Ia memberi tahu mereka bahwa jika mereka menyerah mereka tidak akan dibom dan akan diperlakukan secara baik. Sekelompok orang, termasuk tiga biarawati dan pastor, diminta turun ke kaki gunung untuk membahas penyerahan diri mereka. Akan tetapi semua orang yang tinggal dengan para biarawati tersebut ikut ke pertemuan itu. Pastor yang berbicara dengan tentara, karena hanya ia yang dapat berbicara sedikit bahasa Inggris. Pertemuan berakhir pukul 5 sore akan tetapi mereka tidak diperbolehkan kembali sore itu. Mereka bermalam di bawah pohon tanpa makanan dan kembali pagi berikutnya. Hari berikutnya, 3 Februari 1976, semua 8.000 orang tersebut mengumpulkan barang bawaan mereka dan berjalan kaki ke Bobonaro, perjalanan yang memakan waktu sekitar tiga jam.

Saat mereka menyerah, seorang Timor-Leste anggota Partisan mengetahui bahwa ada anggota Falintil di antara para pengungsi. Anggota Partisan yang lain menyerang anak *liurai*. Akan tetapi komandan tentara Indonesia menghentikan Partisan itu karena menurutnya orang-orang akan takut menyerah kepada tentara Indonesia kalau mereka berpikir hal itu juga bisa terjadi pada mereka.

Kehidupan di Bobonaro yang diduduki Indonesia

Ketika kelompok tersebut menyerahkan diri, tentara Indonesia tidak memberi mereka makanan. Sebagian besar penduduk bisa membawa sedikit makanan dari pergunungan. Kelompok-kelompok lain yang menyerah kemudian oleh prajurit Indonesia diberi semangkuk nasi putih dengan garam saat mereka menyerah.

Penduduk harus tinggal di Kota Bobonaro dan tidak boleh pergi dalam jarak lebih daripada satu kilometer. Beberapa orang tinggal di rumah-rumah di kota, yang sering bukan rumah mereka sendiri. Mereka juga tinggal di bangunan sekolah, gereja, rumah besar bekas tempat tinggal kepala pemerintahan Portugis, di mana para

biarawati tersebut membuka klinik, dan di bangunan-bangunan lain yang dapat mereka gunakan untuk tempat tinggal. Di dalam batas kota, ada satu pos polisi Indonesia, pos komando rayon militer (Koramil), dan sebuah rumah tempat para komandan dan anggota pasukan Kopassandha tinggal. Di jalan-jalan yang keluar dari kota ada enam atau tujuh pos militer. Di tanah lapang terbuka di depan gereja, tentara Indonesia memasang tujuh pelontar mortir yang bisa dipindah-pindahkan dan di tempat lain dipasang sebuah peralatan artileri besar yang dapat meluncurkan 36 roket sekali tembak.

Suster Consuela menuturkan, bunyi mortir yang ditembakkan dari halaman gereja sangat keras hingga memecahkan kaca-kaca jendela dan lampu-lampu di dalam gereja. Tentara Indonesia menembakkan peluru artileri ke segala arah dan Falintil membalas tembakan.

Jika penduduk hendak pergi mencari makanan, mereka harus dikawal oleh seorang prajurit. Akan tetapi banyak orang mati dibunuh, tidak jelas apakah oleh ABRI yang mengira mereka anggota Falintil atau oleh Falintil sendiri. Menurut Suster Consuela, Falintil marah melihat orang-orang menyerah kepada Indonesia dan mereka menembak sejumlah orang. Di Aiasa, tujuh orang tewas oleh ranjau darat dan bom ketika mereka pergi ke sana untuk mencari makanan. Meskipun ada risiko dibunuh oleh salah satu pihak, orang-orang berupaya menyelinap ke luar kota untuk mencari makanan.

Prajurit-prajurit Indonesia memberikan nasi, tepung, susu, dan gula kepada para biarawati dan penduduk yang bersama mereka di klinik, tetapi tidak pernah cukup untuk 27 orang yang tinggal di rumah tersebut. Berbulan-bulan Suster Consuela hanya makan bubur yang dibuat dari beras satu kali sehari. Ia merasa sangat tertekan dan terlalu lemah untuk naik-turun tangga. Ia merasa tidak berdaya menolong anak-anak yang amat sangat kelaparan yang datang meminta makanan. Para prajurit sering bertanya kepada biarawati apa yang mereka butuhkan dan apa yang tidak ada di rumah. Yang ia minta hanyalah makanan. Akhirnya para prajurit itu memberi mereka beras, gula, susu, dan minyak goreng secara teratur, yang mereka bagi dengan orang-orang yang tinggal bersama mereka, terutama anak-anak.

Waktu itu ada seorang dokter dan perawat Indonesia dari Palang Merah Indonesia di Bobonaro saat orang-orang menyerah pada Februari 1976. Mereka membantu para biarawati merawat anak-anak yang paling rentan, tapi mereka pergi dari kota itu sekitar April atau Mei dan para biarawati Carmelita tersebut mengambilalih perawatan atas anak-anak itu. Mereka memberi makan 120-180 anak yang kekurangan di klinik itu. Mereka memutuskan memberikan prioritas kepada anak-anak yang paling kecil dan mereka sendiri

yang memberi makan anak-anak itu. Suster Consuela khawatir jika makanan diberikan kepada orangtua mereka, bisa saja makanan tersebut dijual dan anak-anak tidak akan mendapat apa-apa.

Camat setempat membuat catatan jumlah orang yang meninggal. Setiap bulan, dari Februari 1976 hingga akhir tahun itu, 200-300 orang meninggal. Angka tersebut turun sedikit pada awal 1977 dan terus menurun hingga akhir 1979. Sebagian besar yang mati adalah anak-anak. Suster Consuela mengenang:

Pagi hari ada orang mati di sini, orang mati di sana, enam sampai delapan orang mati, di tempat mereka tidur. Tiap hari banyak yang mati karena mereka sangat lemah, kaki mereka bengkak, juga badan mereka penuh cairan. Rambut mereka rontok, perut mereka mengembung. Kami gunakan jarum-jarum kecil untuk mengeluarkan cairan dari tubuh mereka. Orang-orang datang malam hari. Esok harinya orang ini akan mati, yang lain akan mati! Saya di sana dan saya lihat ini! Saya lihat banyak perempuan hamil yang baru saja melahirkan dan sangat lemah karena kehilangan darah.

Menjelang akhir 1976 tentara Indonesia mulai mengeluarkan “surat jalan” yang mengizinkan orang pindah ke luar kota ke ladang-ladang sekitar. Tahun-tahun yang paling sulit adalah 1976-1978 sebelum penduduk diberi keleluasaan lebih untuk pergi ke ladang mereka. Akan tetapi baru pada 1983 keadaan benar-benar kembali normal dan penduduk diperbolehkan kembali ke desa asal mereka.

Setelah kelompok pertama meninggalkan hutan untuk tinggal di Bobonaro pada 3 Februari 1976, kelompok-kelompok penduduk selanjutnya menyerah hampir setiap minggu hingga 1979. Di antara yang terakhir menyerah adalah orang Bunak, yang hidup di tengah hutan selama tiga tahun. Banyak yang menyerahkan diri dalam kelompok besar hingga 700 orang. Mereka yang menyerah selalu dalam keadaan sangat lemah. Banyak yang terlalu lemah sehingga tidak dapat berjalan kaki kembali ke kota.

Hidup dan mati di pergunungan (1976-1978)

89. Pada tahap pertama invasi, tentara Indonesia memusatkan pada pengambilalihan kota dan desa yang strategis serta jalan-jalan penghubung. Banyak orang tinggal di desa-desa di luar kendali Indonesia. Pada tahap invasi ini, penduduk sipil yang lari menghindari pasukan Indonesia yang bergerak maju, terpecah di wilayah pedalaman. Karena serangan militer secara umum tidak diarahkan langsung ke kawasan pedalaman, orang-orang yang tinggal di sana dapat bertani dengan baik dan hidup cukup aman. Gilman dos Santos menguraikan kepada Komisi keadaan tahun-tahun awal konflik:

Antara tahun 1975 dan 1977 keadaan makanan di hutan tidak begitu buruk. Orang-orang tidak mengalami banyak masalah karena pada waktu itu mereka masih dapat bergerak dan bebas menanam tanaman sesuai musim. Mereka dapat menghasilkan bahan makanan. Tentara Indonesia hanya menguasai kota-kota kabupaten dan kecamatan, meskipun tentara Indonesia melakukan serangan ke hutan-hutan.⁸⁸

90. Akan tetapi, sejak pertengahan 1977 ABRI mulai bergerak ke wilayah-wilayah yang belum dikuasainya. Bagi orang-orang yang mengungsi dari tempat tinggalnya karena ingin mencari selamat di luar kota, gerak maju tentara Indonesia ke kawasan ini memaksa mereka terus-menerus berpindah.

Strategi *base de apoio* Fretilin

91. Pada konferensinya di Soibada (Manatuto) pada Mei 1976, Komite Sentral Fretilin membentuk struktur untuk mengorganisasi penduduk sipil yang berada di wilayah yang dikuasainya dan untuk meningkatkan efektivitas sayap bersenjata, Falintil (lihat Bagian 5: Resistansi: Struktur dan strategi). Pemikiran yang mendasari perubahan ini adalah bahwa rakyat Timor-Leste terlibat dalam peperangan sekaligus melancarkan revolusi. Untuk mencapai dua tujuan ini, di setiap zona administratif dibangun basis militer dan pendukung sipil (*base de apoio*). Pemimpin Fretilin mengumpulkan para pengungsi di *bases de apoio*, yang menjadi pusat dukungan logistik bagi penduduk sipil dan Resistansi selama hampir tiga tahun. Basis yang terakhir dihancurkan pada November 1978. Xanana Gusmão menuturkan dasar pembentukan basis-basis tersebut:

Konsep base de apoio muncul ketika penduduk lari ke hutan setelah Indonesia menginvasi tanggal 7 Desember... Tiba-tiba kami dalam keadaan perang, tetapi penduduk masih berada di antara kita. Konsepnya ialah membangun dasar yang memberi dukungan politik dan logistik, tetapi yang lebih banyak dukungan politik, yang dapat kami katakan revolusioner.⁸⁹

Vemasse (Vemasse, Baucau)

92. Masyarakat Vemasse (Vemasse, Baucau) pindah tiga kali sebelum akhirnya mereka berkumpul dengan penduduk lain yang mengungsi di satu wilayah yang dikuasai dan diorganisasikan oleh Fretilin di Uaimori (Viqueque). Dalam kesaksiannya di depan Komisi, Cosme Freitas menuturkan bahwa penduduk Vemasse pada mulanya meninggalkan kota mereka karena mendengar kabar bahwa ABRI telah membunuh sepuluh penduduk sipil di dekat *aldeia* Cairabela pada 11 Desember 1975. Seorang guru bernama Fransisco Feliciano Ximenes memimpin penduduk untuk keluar dari kota menuju Gunung Lame yang terletak di ujung selatan kota. Penduduk dari Cairabela dan Bucoli (Baucau, Baucau) bergabung

dengan mereka. Mereka membangun barak sementara di Gunung Lame. Oleh karena tentara Indonesia belum menetap di Vemasse, penduduk dari Vemasse dapat kembali ke desa asal untuk memanen hasil kebun sebagai bekal yang cukup untuk makan. Pada pertengahan Maret 1976 tentara Indonesia menyerang permukiman sementara mereka dengan tembakan bazooka dan mortir hingga seluruh barak dan persediaan makanan mereka hancur.⁹⁰

93. Para pengungsi kemudian pindah sejauh 8 km ke selatan, di sepanjang Sungai Vemasse sampai ke Uai-Gae. Di sana mereka dapat berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Tetapi pertempuran terus mendekat, dan karena itu mereka harus berpindah lagi. Setiap kali penduduk Vemasse berpindah, mereka pindah ke tempat yang semakin sulit. Dari Uai-Gae mereka berjalan sejauh 8 km ke Gunung Uai Knassa di timur. Akhirnya mereka berjalan menuju Uaimori (sekarang di Bibileo, Viqueque) yaitu ke gunung yang terletak sekitar 20 km di selatan Vemasse. Fretilin telah menjadikan Uaimori sebagai satu *base de apoio*. Orang-orang yang berasal dari Viqueque, Dili, dan bagian-bagian lain Timor-Leste juga ada di sana. Mereka tinggal di sana selama dua tahun. Seiring waktu berlalu, kehidupan menjadi semakin sulit. Orang yang datang semakin banyak dan makanan tidak cukup.⁹¹ Pada 1978 Uaimori diserang dan penduduk kembali mengungsi. Akhirnya, sebagian dari mereka ditangkap dan dibawa ke kamp yang berada di bawah pengawasan tentara Indonesia di Bucoli.⁹²

Covalima

94. Pasukan tentara Indonesia memasuki Distrik Covalima pada awal Februari 1976. Mereka menyerang melalui darat dan udara, dan menembaki dengan meriam dari laut. Sasaran mereka adalah menguasai kota-kota di Covalima, bukan kawasan perdesaan. Falintil menderita kerugian akibat serangan ini, begitu pula warga kota dan desa-desa. Para pemimpin Fretilin mendesak penduduk untuk menyelamatkan diri ke gunung-gunung di luar kota. Kebanyakan orang yang berasal dari Subdistrik Fohorem, Fatululik, Fatumean, dan Tilomar menyingkir sejauh 10 km ke timurlaut menuju Gunung Taroman. Mereka juga pergi ke Desa Dato Tolu (Fohorem), Fato Loro (Fatululik), Taroman (Fatululik), dan Lactos (Fohorem). Banyak orang dari Kota Suai menyingkir sejauh 10 km ke utara dan barat laut, ke Subdistrik Maucatar. Tidak semua penduduk Suai mengungsi. Sebagian dari mereka bersembunyi di kebun-kebun atau di dekat pantai selama beberapa hari, setelah itu menyerah kepada tentara Indonesia.⁹³

95. Penduduk Subdistrik Zumalai juga mengungsi. Mereka pergi ke arah yang berbeda-beda. Ada yang pergi ke barat menuju Lolotoe. Di sana mereka menyebar di kawasan yang membentang dari *aldeia* Gala (Desa Beco, Suai) ke *aldeia* Zoilpo (Desa Guda, Lolotoe, Bobonaro), dan ke bawah gunung Zoba (Desa Opa, Lolotoe, Bobonaro), dan Labarai (Suai, Covalima). Lainnya yang berasal dari Zumalai lari ke barat laut menuju Zulo (Mape/Zumalai). Semuanya adalah daerah berbukit-bukit atau dataran rendah, yang berjarak 10 km atau kurang dari Zumalai. Sedikit orang yang tinggal di dekat perbatasan menyingkir ke Kabupaten Betun yang terletak di

Timor Barat, Indonesia. Banyak orang yang telah tinggal di kawasan pergunungan samasekali tidak meninggalkan rumah mereka, karena pasukan tentara Indonesia masih jauh.⁹⁴

96. Pada awalnya, menurut kesaksian para saksi, orang-orang yang mengungsi di Distrik Covalima hanya memakan makanan yang mereka bawa dari rumah.⁹⁵ Mereka mengira perang akan berlangsung hanya dua atau tiga bulan. Ketika bahan makanan mereka habis, mereka mengalami kelaparan dan terserang berbagai penyakit. Namun setelah dua bulan berlalu, organisasi pemuda dan perempuan Fretilin, Organização Popular Juventude de Timor (OPJT) dan Organização Popular da Mulher Timorense (OPMT), mulai mengatur pasokan makanan. Ini memperbaiki keadaan dan membuat rakyat dapat bertahan hidup di gunung selama satu setengah tahun.⁹⁶ Ketika tentara Indonesia melancarkan serangan besar-besaran terhadap Resistansi yang berbasis di sekitar perbukitan Lolotoe pada akhir 1977, *base de apoio* tersebut hancur. Penduduk menjadi tercerai-berai dan banyak di antara mereka yang ditangkap pada waktu itu.

Tabel 4: Beberapa basis utama Resistansi

| Tempat | Distrik | Penduduk dari |
|-----------------------------------|-----------------|--|
| Zumalai | Ainaro/Covalima | Zumalai, Ainaro, Hato Udo |
| Remexio | Aileu | Remexio, Lacro, Aileu, Dili |
| Gunung Matebian | Baucau | Quelicai, Laivai (Illilai), Laga, Baucau, Bagaia, Venilale, Lospalos, Manatuto, Viqueque, Same, Dili |
| Bagaia | Baucau | Lospalos, Bagaia, Iiomar, Uato Carbau |
| Cailaco | Bobonaro | Cailaco, Hatolia, Letefoho, Maubara, Atabae |
| Gunung Taroman | Covalima | Distrik Covalima |
| Zoilpo dan Maucatar | Covalima | Distrik Covalima, Lolotoe, Ermera, Ainaro |
| Halik, Labarai, Zova, Beco | Covalima | Distrik Covalima, Lolotoe, Ermera, Ainaro |
| Katrai Leten (Gunung Ramelau) | Ermera | Letefoho, Ermera, Ainaro, Aileu, Cailaco |
| Fatubessi | Ermera | Ermera, Cailaco, Maubara, Dili, Aileu, Ainaro, Suai |
| Iliomar | Lautém | Iliomar, Uato Carbau, Lospalos |
| Mehara | Lautém | Distrik Lautém |
| Malehui (Maubara) | Liquiça | Maubara, Leimea Kraik, Railaco, Atsabe, Ainaro, Zumalai |
| Manufahi Sektor Selatan dan Utara | Manufahi | Manufahi, Dili, Aileu, Maubisse, Manatuto, Soibada, dan tempat-tempat lain |
| Alas | Manufahi | Manatuto, Same, Dili, Liquiça, Ermera, Aileu, Ainaro |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Fatuberliu | Manufahi | Turiscail, Maubisse, Aileu, Liquiça, Dili |
| Gunung Kablaki | Manufahi | Mau Chiga, Same, Letefoho, Aileu, Atsabe |
| Laclo | Manatuto | Distrik Manatuto, Dili, Aileu |
| Natarbora | Manatuto | Manatuto, Same, Dili, Liquiça, Ermera |
| Laclubar | Manatuto | Laclubar, Soibada, Manatuto |
| Barique | Manatuto | Natarbora, Lacluta, Barique, Same |
| Laleia | Manatuto | Baucau, Manatuto, Viqueque |
| Ossu | Viqueque | Ossu, Viqueque |
| Uaimori | Viqueque | Vemasse, Baucau, Venilale, Ossu, Lacluta |
| Uatolari | Viqueque | Ossu, Viqueque, Uatolari, Uato Carbau |
| Gunung Bibileo | Viqueque | Lacluta, Aitana, Ossu, Laleia, Natarbora, Barique, Maubisse, Same. Kemudian pindah ke Gunung Matebian. |
| Lacluta | Viqueque | Lacluta, Ossu, Baucau, Viqueque |
| Lobito | Viqueque | Vemasse, Baucau, Venilale, Ossu, Lacluta |
| Gunung Builo | Viqueque | Viqueque Vila, Uato Carbau, Ossu, Baucau, Lospalos |

Sumber: Catatan penelitian CAVR

97. Ketika serangan Indonesia meningkat, pengamanan yang lebih ketat diterapkan di *bases de apoio*. Kamp-kamp diatur dalam lingkaran-lingkaran dengan pasukan Falintil (*Companhias de Intervenção*) di garis batas luar, pasukan pertahanan sipil yang bernama *Força de Auto-Defesa* (Fade, juga dikenal dengan nama *Armas Brancas*) membentuk lingkaran selanjutnya, dan penduduk sipil terkonsentrasi di tengah. Penduduk dilarang bergerak ke luar garis batas.⁹⁷

Kehidupan di *base de apoio*

98. Kehidupan di *base de apoio* sangat terorganisasi. Setiap orang diharuskan bekerja di kebun komunal dan kebun milik pribadi mereka sendiri. Organisasi pemuda dan wanita, OPJT dan OPMT, bertugas mengatur setiap orang untuk menanam padi, jagung, umbi-umbian, dan tanaman bahan makanan lainnya yang akan didistribusikan kepada orang yang membutuhkan dan memberi makan para prajurit Falintil. Para perempuan diwajibkan menenun pakaian dan membuat obat tradisional. Bangunan sekolah seadanya dibuat untuk mengajarkan baca-tulis dan ideologi politik. Pada malam hari mereka menyanyikan lagu-lagu untuk meningkatkan semangat rakyat agar percaya bahwa mereka bisa merdeka. Sebagian orang mengenang masa itu sebagai saat yang berkesan, saat berbagi dan berjuang bersama-sama.

Pandangan seorang perempuan muda mengenai kehidupan di *base de apoio*⁹⁸

Maria José da Costa lahir pada 1962. Ia berusia 13 tahun ketika tentara Indonesia menginvasi Dili pada 1975. Ketika pasukan Indonesia bergerak maju ke arah Soibada (Manatuto) pada 1977 ia lari bersama seluruh warga Desa Manlala lainnya, bersembunyi di dekat hutan Lehutala. Mereka membuat pondok-pondok kecil di dekat kebun agar bisa mencari bahan makanan. Ketika pasukan tentara Indonesia bergerak maju, semua warga berpindah ke Fatuberliu di Manufahi. Mereka membangun pondok-pondok kecil dan sebuah sekolah. Maria dan dua orang gadis lainnya mulai mengajar anak-anak, dengan menggunakan arang dan jari mereka untuk menulis di atas tanah. Mereka mengajari murid-murid bagaimana menghadapi kesulitan, dengan menggunakan metode pengajaran yang telah dikembangkan di Mozambik. Mereka memulai mengerjakan kebun komunal bersama anak-anak, untuk membantu keluarga agar bisa bertahan hidup. Tetapi sejumlah orang tetap meninggal dunia akibat kelaparan dan penyakit pada masa itu.

Sekolah tersebut hanya dapat berjalan sekitar dua bulan sebelum akhirnya, lagi-lagi, diserang oleh tentara Indonesia. Untuk yang ketiga kalinya para warga pindah, kali ini ke Lakudadur, yang masih berada di sekitar wilayah Fatuberliu. Mereka sekali lagi membangun pondok-pondok di sana, tetapi keadaan tidak memungkinkan bagi mereka untuk kembali lagi ke Manlala memanen ladang mereka.

Memasuki 1978 sejumlah besar orang berkumpul di sekitar wilayah Fatuberliu, tersingkir ke sana oleh serangan militer Indonesia. Penduduk setempat membantu para pendatang baru, namun di antara mereka ada keluarga yang benar-benar kekurangan makanan. Sekitar 10 km dari tempat tinggalnya, Maria memperkirakan ada 400 sampai 500 orang yang mengungsi. Sekitar 200 di antara mereka menderita kurang gizi. Maria dan teman-temannya bergabung dalam satu organisasi bernama *Comissão de Apoio e Solidaridade* (CAS, Komite Solidaritas dan Bantuan), yang menyediakan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan.

Organisasi-organisasi Fretilin yang lain, termasuk organisasi pemuda dan perempuan, OPMT dan OPJT, berusaha mengumpulkan makanan. Sebelas perempuan muda bergiliran membawa makanan dengan kuda ke tempat-tempat yang membutuhkan, termasuk Sarin dan Fukiran (Alas, Manufahi) dan Fatuberliu. Sebelas perempuan muda tersebut dibagi dalam dua kelompok dan bekerja selama seminggu di setiap lokasi. Setiap pagi mereka harus membuat campuran ubi dan jagung yang ditumbuk, dan daging rusa bila ada. Mereka menyalurkan

makanan tersebut kepada orang yang membutuhkan dua kali sehari. CAS juga mengajar penduduk tentang pentingnya memasak air minum, bagaimana membuat kakus, dan aspek-aspek kesehatan lainnya. Dengan dibantu seorang perawat bernama Felisberto Gouveia Leite, mereka belajar membuat obat tradisional dari akar dan tumbuh-tumbuhan. Mereka juga mengatur pemakaman bagi yang meninggal dunia. Selama dua bulan, sekitar empat orang meninggal setiap hari. Maria masih ingat bagaimana ia merawat seorang anak yang sakit parah, yang akhirnya meninggal dunia. Mereka meminta para pemimpin masyarakat agar memberikan dukungan moral kepada orang-orang melalui pidato dan ceramah tentang tujuan Fretilin. Pada malam hari mereka punya waktu bebas untuk bermain drama, bernyanyi, menari, dan bercerita. Selama periode ini banyak lagu-lagu perjuangan digubah. Keadaan sangat sulit, tetapi di malam hari mereka dapat berkumpul bersama seperti itu sehingga mereka tidak pasrah saja menerima keadaan.

Dua bulan kemudian Maria dan teman-temannya harus menghentikan seluruh kegiatan mereka karena lagi-lagi pasukan Indonesia menyerang tempat mereka. Untuk yang keempat kalinya mereka harus pindah. Serangan dimulai pada Agustus 1978 dan berlangsung selama tiga bulan. Sebelas perempuan muda, semuanya berusia di bawah 18 tahun, adalah anggota CAS yang berada di bawah koordinasi Soi Mali (Maria José Brites Boavida) dan Aurora Assunção Sarmento. Kebanyakan anggota CAS adalah keluarga Nicolau Lobato. Hanya lima orang yang selamat dari peperangan. Banyak yang meninggal dunia pada 1978 atau 1979. Sebagian ditembak, sebagian lagi diculik dan dihilangkan.* Maria masih hidup karena ia menyerah di suatu wilayah tempat ia tidak dikenal. Sedikit orang yang tahu tentang kegiatannya, tidak mengungkapkan apapun. “Saya yakin kalau tentara Indonesia tahu bahwa saya aktif dalam Fretilin, mereka pasti telah membunuh saya pada 1979 ketika saya menyerah. Saya waktu itu berumur 16 tahun.”

99. Walaupun mereka mendukung Fretilin dan sadar akan perlunya membantu pasukan, yang lain menganggap kerja yang diharuskan untuk menggarap tanah sebagai “kerja paksa secara halus”. Hal ini khususnya berlaku bagi perempuan, yang memikul beban utama memberi makanan dan menjahitkan pakaian untuk pasukan.⁹⁹ Beberapa orang mengenang hal ini secara lebih ekstrem sebagai masa kerja paksa, meningkatnya ketidakpercayaan, tiadanya toleransi bagi perbedaan pendapat, dan pengadilan yang keras. Disiplin ditegakkan dengan *linha da luta*

* Komisi memperoleh keterangan bahwa Felisberto Gouveia Leite, istrinya Alexandrina, empat anak, dan seorang anak asuh, mereka dieksekusi di Fahenehan, Fatuberliu, pada Juli 1979 [lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa].

(garis perjuangan) dan sangat ketat. Persoalan publik dan pribadi diselesaikan oleh para kader politik.¹⁰⁰ Penduduk Defawasi (Baguia, Baucau) menuturkan ketentuan yang keras tersebut sebagai berikut:

Hukuman dan siksaan merupakan bagian dari keadaan darurat perang. Yang melanggar dimasukkan penjara tradisional yang bentuknya seperti kandang babi. Untuk pelanggaran yang ringan, dihukum mempersiapkan tanah untuk pertanian dalam ukuran tertentu yang ditentukan melalui asembleia populer (suatu jenis pengadilan rakyat yang terbuka).¹⁰¹

100. Secara umum produksi makanan dapat memenuhi kebutuhan penduduk di basis-basis selama lebih dari satu tahun. Ketika serangan tentara Indonesia terus meningkat, persediaan makanan pun terganggu. Jumlah penduduk sipil yang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan pengeboman terus meningkat secara dramatis. Penduduk semakin terkonsentrasi pada sejumlah tempat terpencil seperti di Gunung Matebian, Alas, dan Lembah Natarbora. Komisi menerima kesaksian yang menggambarkan kesulitan dan kematian yang dialami pada masa ini. Penduduk Ahic (Lacluta, Viqueque) mengisahkan kehilangan yang mereka derita pada waktu itu:

Setelah pengeboman dimulai, Fretilin menyuruh rakyat lari ke hutan dan kami terus-menerus bergerak seperti yang diperintahkan Falintil. Mereka membuka dua tempat untuk mengolah sagu, satu di Kohok (sekarang Wekfiar), dan yang lain disebut CP-2 (Centro Piloto-2, Pusat Percontohan 2). Di CP-2 orang-orang juga punya kesempatan bekerja di sawah di Aitara, Buadara, dan We-Beikas, We-Look. Pada tanggal 10 Juli 1978 ABRI bersama Hansip menyerbu Ahic dan penduduk mulai lari ke barat ke Uma-Tolu, lewat Zona Barique Bora ke Sungai Sahen. Di Sungai Mauruick di Zona Barique terjadi pertempuran antara Falintil dan ABRI, dan banyak keluarga terpisah. Falintil memberi perintah melarang ternak dibawa, jadi semua binatang kecuali kuda harus dibunuh. Dari pos di Aitoos kami harus lari ke Natarbora di Sungai Sahen. Dari sana kami lari menghindari lebih banyak serangan dan menuju ke timur sepanjang pantai di sebelah selatan Werow, Hali-Boco, Mota Dilor, Aimanas Rai, dan kemudian ke Welalir, Nuhukmesak, dan ke tempat-tempat lain. Beberapa orang ingin kembali dan memanen padi dari sawah mereka di Aitara dan Buadara tetapi pengeboman memaksa mereka meninggalkan tanaman mereka. Tak seorangpun punya kesempatan bercocok-tanam karena selalu diganggu oleh musuh. Kami harus tinggalkan harta benda kami dan harta milik itu dijarah oleh ABRI dan Hansip. Banyak anggota keluarga mati... Nilai kehilangan kami tidak bisa dihitung.¹⁰²

101. Banyak orang lain memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai kematian anggota keluarga mereka akibat kelaparan dan kurangnya perawatan medis di kawasan pergunungan. Berikut kisah-kisah yang merupakan contoh dari penderitaan itu:

- Moises Quintão menuturkan kepada Komisi:

Gunung Kablaki telah dihancurkan. Seorang komandan Fretilin mengorganisir keluarga saya untuk pergi ke hutan. Ibu saya, Prisca de Araújo, meninggal dunia ketika [tentara Indonesia] mengebom Uskai. Kami lari ke Mau-Ulo (Ainaro, Ainaro), kemudian ke Fatumeta. Kami tinggal di sana selama lima hari dan anak laki-laki saya Evalino meninggal di sana. Kami berjalan menuju Mauleo. Istri saya Ludvina da Costa meninggal karena kelaparan di hutan di wilayah Ainaro pada tahun 1977.¹⁰³

- Seorang lelaki dari Ainaro (identitas disembunyikan) menggambarkan pengungsian massal penduduk ke Sektor Centro saat selama perjalanan lebih daripada 1.600 orang meninggal dunia karena kelaparan dan hanya sedikit sekali yang dapat bertahan hidup.¹⁰⁴

- Mateus da Silva dari Baucau mengungkapkan kepada Komisi:

Pada tahun 1976-1977 tentara Indonesia melancarkan operasi di Uato Carbau dan Baguia. Di sana terjadi baku tembak antara [ABRI] dan Falintil. Keluarga saya dan penduduk lainnya menyingkir ke kaki Gunung Matebian. Ketika mereka mengebom Ketikura, bunyi senjata membuat orang-orang ketakutan tidak berani untuk mencari bahan makanan. Hal ini menyebabkan banyak anak dan orang tua meninggal dunia karena kekurangan makanan. Anak saya meninggal karena istri saya tidak mampu memberikan susu untuknya. Baku tembak terus berlangsung dan kakek saya yang umurnya sekitar 60 tahun meninggal karena kelaparan. Bulan November 1978 kami menyerah di Subdistrik Baguia. Tetapi di sana juga kekurangan makanan dan obat-obatan. Banyak yang meninggal, termasuk ibu saya.¹⁰⁵

- Seorang lelaki dari Baucau (identitas disembunyikan) menggambarkan bagaimana pada Oktober 1977 Falintil memerintahkan rakyat untuk pindah ke Gunung Matebian. Sejak waktu itu sampai mereka menyerah pada 1979, banyak orang mati. Sesudah menyerah, menurut penuturannya, kematian tetap berlanjut.¹⁰⁶

- Moises da Costa dari Manufahi mengatakan kepada Komisi:

Karena perang maka kami lari ke Wetare, Alas, pada tahun 1978. Kami bercocok tanam, tetapi tentara Indonesia menyerang kami sehingga kami tidak dapat memanen tanaman kami. Kami meninggalkan segala yang kami miliki dan pindah ke We Alas. Kami menanam padi dalam jumlah besar, tetapi musuh terus menyerang maka kami harus pindah ke satu wilayah pesisir bernama Kolakau. Kami terpisah di

sana dan ayah saya ditangkap oleh tentara Indonesia. Kami pindah lagi ke sebuah daerah bernama Wemer yang kami tempati selama delapan bulan. Kemudian kami pindah lagi ke Atabita. Di sana ibu saya meninggal dunia karena sakit dan kelaparan. Obat-obatan tidak ada. Hari berikutnya adik perempuan saya meninggal dunia. Kami menguburkan mereka baru kemudian pindah ke Lokfeu. Di sana kami punya seorang teman bernama Calistro yang membawa kami untuk menyerahkan diri di Uma Metan atas perintah dari [ABRI]. Saudara saya, Domingos dos Santos, meninggal dunia di tempat ini [Uma Metan] karena kekurangan makanan dan obat-obatan. Waktu itu ia baru berusia 22 tahun.¹⁰⁷

- Mateus da Conceição dari Manufahi mengisahkan kepada Komisi bahwa pada 1978:

Kami dikumpulkan di wilayah Kolakau dan Besusu (Uma Berloik, Alas, Manufahi) ketika musuh menyerang kami. Penduduk tidak bebas bergerak, dan karena itu banyak penduduk sipil yang mati. Ratusan jumlahnya. Mereka mati karena kelaparan dan penyakit.¹⁰⁸

- Luis Casimiro Martins dari Aiceu di Raimerhei (Ermera, Ermera) menuturkan kepada Komisi banyaknya orang yang meninggal dalam komunitasnya antara 1975 dan 1980. Ia mencatat kematian yang dialami oleh 27 keluarga yang tinggal di Aiceu dan yang melarikan diri ke gunung ketika tentara Indonesia memasuki desa mereka pada Maret 1976. Secara keseluruhan, ia mencatat 230 orang meninggal dan penyebab kematian mereka. Ia mendaftar 11 orang meninggal pada 1975; 1976, 51 orang; 1977, 74 orang; 1978, 54 orang; 1979, 30 orang; dan sepuluh orang pada 1980. Ia mengelompokkan mereka sebagai berikut: mati akibat pengeboman (3), tidak dikuburkan (12), mati karena terluka (14), hilang (15), meninggal karena kelaparan (14), meninggal karena penyakit dan kelaparan (181), dan ditembak oleh ABRI (1).¹⁰⁹

102. Ketika keadaan memburuk dan pengeboman meningkat, banyak orang ingin menyerah untuk menyelamatkan nyawa mereka dan keluarga mereka. Mereka dilarang melakukan hal itu karena alasan politik. Fretilin percaya bahwa legitimasi politiknya akan rusak jika rakyat menyerah, dan bahwa mendorong orang untuk menyerah merupakan tindak pengkhianatan.

Penahanan karena ingin menyerah

103. Pemimpin Fretilin mengontrol dengan ketat penduduk yang tinggal di sekitar *base de apoio*. Praktik pengadilan sederhana dibentuk untuk menghukum mereka yang tindakannya dianggap membahayakan atau membawa risiko kepada masyarakat. Seseorang yang dianggap telah melakukan kesalahan akan ditangkap dan dihadapkan pertama kepada pemimpin militer dan setelah itu dibawa ke pemimpin sipil zona yang bersangkutan. Orang yang menentukan apakah seseorang

telah melakukan kesalahan adalah komisaris politik regional (*Comissário Política Regional*, CPR). Ia bertanggung jawab memastikan diikutinya garis politik Fretilin. Kadang-kadang, terutama di hari-hari awal, diadakan pengadilan rakyat (*Justiça Popular*). Tetapi komisaris politik sangat besar pengaruhnya pada pengadilan rakyat. Mereka yang ditemukan bersalah segera ditahan di penjara darurat di tempat yang dikenal sebagai *Renal* (*Rehabilitação Nacional*).

104. Banyak tahanan yang ditempatkan di *Renal* mengalami penganiayaan dan penyiksaan [lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan]. Ketika pengeboman dan kelaparan meningkat, sebagian orang yang tinggal di kawasan *base de apoio* ingin menyerah kepada tentara Indonesia. Namun oleh Fretilin menyerah dianggap membahayakan keselamatan pasukan Fretilin dan penduduk yang bersama mereka.

105. Komisi memperoleh banyak kesaksian mengenai orang yang dipenjarakan karena para pemimpin percaya bahwa mereka akan menyerah atau dicurigai telah atau berniat melakukan kontak dengan pasukan Indonesia. Antonino Rodrigues dari Faturilau, Fahi Soi (Lequidoe, Aileu), ditangkap oleh Fretilin pada 1978. Faturilau telah diserang oleh ABRI. Karena Antonino merasa takut dan ayahnya yang berumur 50 tahun, Berleki, dalam keadaan sakit, mereka berdua berusaha melarikan diri dengan berkuda pada malam hari. Sebelum mereka berhasil meninggalkan Faturilau, mereka ditangkap oleh F41, yang menjadi asisten keamanan untuk *adjunto*, F42, dan sembilan orang lainnya. F41 dan anakbuahnya menangkap Antonino Rodrigues karena dicurigai telah melakukan hubungan dengan ABRI. Pagi berikutnya mereka melonggarkan, namun tidak melepaskan, borgol di tangannya dan membawa mereka ke *Adjunto* F42 di Sungai Sumiun. F42 menyuruh salah seorang komandannya, F43, untuk memukul, menendang, dan menginjak-injak Antonino Rodrigues selama satu jam. Setelah itu F42 memerintahkan Antonino Rodrigues untuk mengangkut peralatan Falintil selama perjalanan.¹¹⁰

106. Miguel da Costa dari Desa Sabuli (Metinaro, Dili), melaporkan bahwa pasukan Fretilin menangkap saudaranya Jorge Carvalho pada 1977 karena ia didapati sedang bermain sepak bola dengan bola yang ia temukan di pantai. Falintil curiga dan mengira ia telah berhubungan dengan pasukan tentara Indonesia yang berada di kota dan menyimpulkan bahwa ia seorang mata-mata Indonesia. Pasukan Fretilin menahannya di *Renal* di Remexio (Aileu), di tempat ini ia kemudian meninggal dunia.¹¹¹

107. Lucia de Jesus Barreto melaporkan bahwa pada 1978 ia bersama keluarganya berada di *base de apoio* di Fatuberliu (Manufahi). Karena kekurangan makanan, putranya Bastião da Silva, yang saat itu berumur 14 tahun bersama temannya Alcino da Costa pergi ke Lisimori di Desa Mada Beno (Laulara, Aileu) untuk mencari makanan. Mereka ditangkap oleh Falintil karena dicurigai menjadi mata-mata. Keduanya ditahan di *Renal* di Remexio dan diberi sangat sedikit makanan. Bastião da Silva jatuh sakit dan meninggal di dalam *Renal*.¹¹²

108. Agostinho da Costa mengungkapkan kepada Komisi bahwa pada 1976 ia bersama keluarganya mengungsi ke satu wilayah bernama Komite Rame, Uatu-Uani

(Ossu, Viqueque), tempat banyak pengungsi berkumpul setelah terjadi serangan tentara Indonesia. Mereka pindah ke Leki Loho yang berada di dalam kekuasaan Falintil dan merupakan tempat *Renal*. Selama waktu itu, seorang *liurai* dari Kota Ossu, Gaspar Reis, melarikan diri bersama pengikutnya dan menyerahkan diri kepada tentara Indonesia di Kota Ossu. Karena hal ini, Agostinho dan keluarganya ditangkap oleh pemimpin Falintil. Ia mengatakan kepada Komisi:

Mereka menempatkan saya dan istri saya Domingas da Costa, anak saya Mau-Naha, dan delapan orang lainnya di dalam satu "kandang babi." Kami dipukul dengan batang kayu, ditendang, ditinju, dan digampar. Kami diberi minum air yang dicampur dengan garam. Malam harinya tangan kami diikat ke belakang punggung. Kami berada di Renal Leki Loho selama satu tahun. Teman saya, Olo-Gari, meninggal dunia karena disiksa oleh Falintil.¹¹³

Dituduh berencana menyerah¹¹⁴

Elias Quintão adalah pemimpin Fretilin (*delegado*) untuk wilayah Desa Hatu Makerek (Laclubar, Manatuto). Dalam wawancara yang terperinci ia mengemukakan kepada Komisi tentang pengalamannya ditahan oleh Fretilin dan derita kelaparan para tahanan dalam keadaan ini. Berikut ringkasan wawancara tersebut.

Penduduk Desa Hatu Makerek telah melarikan diri ke hutan di dekat rumah mereka setelah tentara Indonesia melakukan invasi. Pada 15 Agustus 1977 komandan zona Falintil, F44, dan anakbuahnya menangkap Elias Quintão dan pengawalnya, Luis Kehebau. Mereka masih berada di wilayah Hatu Makerek. Orang-orang Falintil mengikat tangan Elias Quintão ke belakang punggungnya. Kepada orang-orang yang menyaksikan, komandan F44 berteriak bahwa Elias Quintão seorang pengkhianat. Mereka menyuruhnya berjalan ke depan kantor tempat ia kemudian diserahkan kepada sekretaris zona, F45, dan kepada komandan Sektor Centro Sul, F46.

Komite zona Laclubar mengatakan bahwa Elias Quintão telah berencana menyerah kepada tentara Indonesia bersama penduduk Hatu Makerek. Mereka menginterogasi Elias Quintão dan memasukkannya ke dalam satu sel. Mereka memasung kakinya dengan bambu. Tangannya masih terikat di belakang punggung. Mereka membebaskan tangan dan kakinya hanya ketika makan. Mereka tidak memukulnya.

Setelah 40 hari berlalu, pada akhir September 1977, F45 mengatakan kepada Elias Quintão bahwa ia akan mengirim para tahanan ke Rameliak (Turisca, Manufahi), yaitu pusat komando untuk Sektor Centro Sul dan tempat *Renal* sektor tersebut. Di sana, Menteri

Kehakiman F50 akan mengurus para tahanan. F45 juga mengancam akan memenggal kepala Elias Quintão. Kemudian Elias Quintão berjalan ke Rameliak dengan diikat bersama seorang tahanan lainnya bernama Sabino dan dijaga oleh empat prajurit Falintil bersenjata.

Setibanya di Rameliak pada pukul 5 sore kedua tahanan tersebut dibawa menghadap Komandan F48 dan F49. Kedua komandan ini memasukkan mereka ke satu sel. Elias Quintão yang tangannya masih terikat berada satu sel dengan Pastor Mariano Soares. Ia berada dalam sel ini selama hampir empat bulan sampai awal Januari 1978. Ia harus bekerja di kebun jagung dan memasak untuk Falintil. Ia selalu dijaga ketat, tetapi tidak dipukuli. Saat bekerja tangannya tidak diikat, tetapi malamnya ia diikat kembali. Menurut Elias Quintão, di Rameliak ada 146 orang tahanan.

Pada awal Januari 1978 ia dipindahkan ke Alas tempat ia ditahan selama lima bulan sampai pertengahan Mei 1978. Ia masih menunggu untuk dihadapkan pada F50, Menteri Kehakiman. Di Alas para tahanan juga harus bekerja. Setelah mandi di sungai, mereka disuruh bekerja di sawah, dengan dijaga prajurit-prajurit Falintil bersenjata. Ia tidak dipukuli tetapi hanya menerima sedikit makanan satu kali sehari, sekitar pukul 2 siang setelah selesai bekerja.

Ketika tentara Indonesia mengepung Alas, para tahanan dipindahkan ke satu tempat dekat Betano. Ia berada di sana sampai akhir Juli 1978. Di sini para tahanan harus bekerja membuat garam untuk Falintil. Lagi-lagi mereka selalu dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Falintil bersenjata, meskipun mereka tidak dipukuli dan hanya mendapatkan sedikit makan satu kali setiap hari. Elias Quintão merasa sangat lemah ketika itu. Ia sakit dan lapar, namun harus tetap bekerja.

Akhirnya pada akhir Juli 1978 Elias Quintão dan 27 orang tahanan yang lain bertemu F50, Menteri Kehakiman. Ia berkata kepada mereka: “Sekarang saya akan menginterogasi kalian. Siapa saja yang terbukti telah melakukan kesalahan akan dihukum. Tetapi, jika hasil interogasi menyatakan kalian tidak bersalah, kalian akan dibebaskan.” Setelah diinterogasi satu demi satu, semua tahanan dibebaskan.

Sesaat setelah mereka dibebaskan, tentara Indonesia kembali menyerang. Batalion 744 menangkap Elias Quintão dan membawanya ke Uma Metan (Alas, Manufahi).

109. Jumlah terbesar kasus pemenjaraan orang-orang yang dicurigai mau menyerah terjadi pada 1977. Saat itu serangan tentara Indonesia ke *base de apoio* Fretilin semakin meningkat. Hidup di dalam hutan menjadi lebih sulit. Sejumlah pemimpin Fretilin dan komandan Falintil cenderung membiarkan penduduk menyerah,

meninggalkan Falintil di gunung untuk melanjutkan perjuangan. Pemimpin Fretilin terpenting yang bersikap demikian adalah Francisco Xavier do Amaral, presiden Fretilin waktu itu. Karena alasan ini Komite Sentral Fretilin menangkapnya pada September 1977. Walaupun ia selamat, banyak teman dekat Francisco Xavier do Amaral dan orang-orang yang dianggap pengikutnya dieksekusi.

110. Dalam Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal, Francisco Xavier do Amaral menggambarkan keretakan yang terjadi di antara para pemimpin Fretilin, dan penahanannya setelah itu oleh Fretilin karena dianggap sebagai “pengkhianat.” Ia mengenang bahwa ia sangat mengkhawatirkan banyaknya penduduk sipil yang sakit dan kelaparan di gunung-gunung bersama Fretilin.

Saya berbicara dengan Nicolau Lobato tentang ini. Saya bilang, “Soal ini sangat serius. Pertama, kita tidak tahu kapan perang ini akan berakhir. Kedua, kita tidak dapat membandingkan pasukan kita dengan tentara Indonesia. Ketiga, bekal logistik kita untuk menyediakan makanan bagi penduduk [tidak cukup]. Keempat, tentara kita terluka, perempuan melahirkan di hutan, anak-anak yatim-piatu, orang-orang yang tangan dan kakinya patah, dan kita tak punya obat-obatan.”

Jadi seperti inilah ide saya. Kami harus mengirim penduduk untuk menyerah. Hanya laki-laki yang kuat dan bisa bertempur tetap tinggal bersama Komite Sentral. Karena kami tidak tahu berapa tahun lagi perang ini berakhir. Kami merencanakan ini, lalu kami pergi ke pertemuan Komite Sentral... Di sana saya menemukan satu atau dua ide yang tidak sama dengan ide saya. Mulai ada perbedaan pendapat dalam Fretilin. Kami mulai terpecah-belah. Beberapa orang berkata bahwa doktrin (Fretilin) ini tidak benar. Beberapa orang menyatakan bahwa doktrin ini benar tetapi orang-orang tidak mengikutinya secara tepat. Beberapa berkata doktrin ini baik. Kami mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain...

Oleh karena itu mereka menangkap saya, memenjarakan saya, dan menuduh saya [...] mengirimkan penduduk untuk menyerah supaya di masa yang akan datang ketika saya menyerahkan diri kepada Indonesia, Indonesia akan memberikan jabatan sebagai jenderal atau menteri kepada saya. Inilah argumen mereka yang menentang saya.¹¹⁵

111. Sebagaimana diungkapkan banyak diskusi masyarakat yang diselenggarakan oleh Komisi, dampak pertentangan ini pada kelompok-kelompok masyarakat yang masih berada di hutan sangat mendalam—khususnya di distrik dan subdistrik tempat dukungan pada Xavier do Amaral dianggap besar seperti Turiscai, Maubisse, Aileu, dan Manatuto. Dua macam kesaksian yang khas mengenai 1977 yang diperoleh dari Distrik Aileu menggambarkan suasana ketika itu. Masyarakat Hoholau (Kota Aileu, Aileu) menyampaikan kepada Komisi:

Penduduk sedih karena penangkapan Xavier. Keadaan menjadi tegang. Guia de marcha (surat jalan) diberlakukan, dan orang yang tak memilikinya disebut pengkhianat. Komite Sentral memerintahkan komandan kami F51 untuk memindahkan penduduk dari Hoholau ke Liquidoe. Kolaborator Zona 3, F52 datang untuk memberitahu penduduk bahwa mereka harus pindah ke hutan di Lequidoe. Kira-kira 500 orang pindah, sedikit yang bertahan di Hoholau. ABRI memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh tiga orang. F52 menembak mati beberapa orang yang tak mau pergi ke Liquidoe. Kira-kira 300 mati di Liquidoe.¹¹⁶*

112. Masyarakat Lausi/Bandudato (Aileu Kota, Aileu) juga menjelaskan kepada Komisi:

Penangkapan Francisco Xavier do Amaral membawa kecurigaan yang meluas. Seorang komandan dari Bandudato, Paulino Xavier Pereira, ditangkap. Sembilan hari kemudian pasukannya pergi mencarinya di Renal, tetapi ia tak ditemukan. Orang yang tak punya guia da marcha dituduh berhubungan dengan musuh, ditangkap, dan dihukum di Rai Kuak Lebututu di bawah kontrol Adjunto F53... Penduduk ingin menyerah tapi harus merahasiakannya.¹¹⁷

Dalam pelarian (1976-1978)

113. Selama tiga tahun pertama pendudukan Indonesia, jumlah orang Timor-Leste yang mengungsi terus meningkat. Pada tahun pertama peperangan, orang-orang menyingkir dari pusat-pusat pemerintahan ke pergunungan di luar kota saat pasukan pendudukan menguasai pusat-pusat tersebut. Kemudian, pada 1977 dan 1978, tentara Indonesia bergerak ke daerah pedesaan untuk menguasai sebagian besar penduduk dan memperlemah perlawanan bersenjata. Seiring berjalannya waktu tindakan ini menyebabkan perpindahan penduduk secara besar-besaran untuk menghindari berada di bawah kekuasaan Indonesia. Perpindahan penduduk yang terus-menerus ini berdampak malapetaka bagi kesejahteraan penduduk.

* Dalam kecaman Komite Sentral terhadap Francisco Xavier do Amaral, dikemukakan bahwa rekan-rekannya telah melanggar larangan mengadakan hubungan dengan musuh, dan menyatakan bahwa gerak semacam itu telah "cukup dibatasi" dengan pemberlakuan kontrol langsung terhadap gerak penduduk oleh Komisariat Politik Sektor Tengah Utara, yang mungkin merujuk kepada pemberlakuan *guia de marcha*. (*A Nossa Vitoria é Apenas Questão de Tempo, Comunicado do Comité do C C da Fretilin de 14/9/77, aquando do traição de Xavier do Amaral* [Kemenangan Kita Hanyalah Persoalan Waktu, Pernyataan Komite Sentral Fretilin tanggal 14/9/1977, mengenai pengkhianatan Xavier do Amaral], halaman 20).

Penghancuran sumber makanan

114. Sistem pertanian tradisional di Timor-Leste telah menunjang kehidupan penduduk generasi demi generasi. Sebelum invasi Indonesia, sebagian besar penduduk tersebar di seluruh wilayah di permukiman-permukiman kecil yang dibangun berdekatan dengan lahan subur. Perpindahan penduduk dari tempat ini karena tindakan militer secara langsung mengakibatkan kekurangan bahan makanan. Lebih buruk lagi, tentara Indonesia juga secara sengaja menghancurkan tanaman pangan, buah-buahan, binatang ternak, dan persediaan bahan makanan pada masa pendudukan ini.

Penghancuran sumber makanan oleh tentara Indonesia

115. Para saksimata mengatakan kepada Komisi bagaimana, ketika ada peningkatan upaya militer Indonesia untuk memaksa penduduk di gunung menyerah, prajurit-prajurit Indonesia menghancurkan tanaman pangan milik penduduk sipil Timor-Leste. Menjelang akhir 1970 strategi penghancuran tanaman pangan ini berakibat langsung pada kekurangan bahan makanan dan kelaparan di seluruh Timor-Leste.

116. Tentara Indonesia menghancurkan tanaman pangan, buah-buahan, dan binatang ternak. Dari keterangan-keterangan yang diberikan di bawah tampaknya taktik ini memiliki berbagai macam motif dan dilakukan dalam keadaan yang berbeda-beda. Kadang-kadang ini tampak sebagai bentuk hukuman dan pameran kekuatan pada penduduk sipil. Pada kesempatan lain, sepertinya lebih dimaksudkan untuk tujuan militer memutus pasokan makanan bagi Falintil. Ini digunakan sebagai bagian dari pemindahan paksa penduduk dari satu desa ke desa lain. Namun dalam keadaan di mana penduduk sipil hanya mengungsi ke tempat yang jaraknya dekat dengan rumah mereka, tujuannya agaknya adalah untuk memaksa penduduk menyerah.

117. Berikut adalah contoh masing-masing gejala tersebut.

118. Komisi mendapatkan bukti bahwa strategi militer untuk menghancurkan sumber bahan makanan sudah dimulai sejak hari-hari awal invasi Indonesia. Misalnya, Komisi mendapatkan kesaksian yang menyebutkan tentara Indonesia melakukan penghancuran sistematis ternak di Metinaro pada Desember 1975.¹¹⁸

119. Seorang deponen lain menyebutkan pengungsian penduduk dari Laleia (Manatuto) ke wilayah Natarbora (Manatuto) pada 1975. Waktu penduduk tidak ada di tempat, militer Indonesia menghancurkan tanaman jagung mereka. Akibatnya penduduk mengalami kesulitan luarbiasa untuk mendapatkan makanan, yang menyebabkan terjadinya kematian.¹¹⁹

120. Dalam satu kejadian lain yang disampaikan kepada Komisi adalah ketika ABRI menyerang desa di Lacluta (Viqueque) pada 1978, penduduk lari ke hutan. Waktu penduduk merasa keadaan aman untuk kembali ke desa mereka, rumah, semua binatang ternak, dan pohon kelapa telah habis dihancurkan oleh tentara Indonesia. Kesulitan mencari bahan makanan yang mereka hadapi memaksa mereka menyerah di Lacluta pada 1979.¹²⁰

121. Pada 1977 di Lacro (Manatuto) tentara Indonesia mengusir para pengungsi yang lapar, yang turun gunung untuk menuai hasil ladang mereka. Kemudian para prajurit membakar kebun dan menembak binatang ternak mereka.¹²¹

122. Komisi menerima satu contoh serupa di Laga (Baucau). Setelah orang-orang melarikan diri ke hutan, tentara Indonesia membunuh binatang ternak mereka, mengambil semua persediaan makanan keluarga, dan membakar rumah penduduk.¹²²

123. Setelah Alda Pereira da Silva dan keluarganya meninggalkan rumah mereka di Osso Rua (Ossu, Viqueque) pada 1976, tentara Indonesia membakar tiga rumah, binatang ternak, dan lumbung padi mereka.¹²³

124. Setelah Agapito Quintão dan keluarganya meninggalkan rumah mereka di Irabin, Letarea (Uato Carbau, Viqueque) tentara Indonesia membakar rumah, cadangan padi, dan membunuh seekor kuda serta lima ekor babi miliknya.¹²⁴

125. Fransisco Barbosa adalah komandan Falintil. Ia dan sekelompok besar penduduk dari Desa Foholau, Orana, dan Matorek (Turiscai, Manufahi) melarikan diri ke Alas dan Welaluhu (Fatuberliu, Manufahi) ketika militer Indonesia menyerang Turiscai pada 1978. Ketika ia dan 150 orang lainnya ditangkap, pasukan tentara Indonesia dan Hansip membawa mereka kembali ke Turiscai. Militer Indonesia telah membakar rumah mereka, alat-alat pertanian, cadangan jagung, dan ubi kering. ABRI juga telah mengambil makanan mereka untuk dijual di kota. Hanya sedikit kentang dan ubi jalar yang masih tersisa di dalam kebun mereka.¹²⁵

126. Pada 1978 tentara Indonesia dan Hansip menyerang *aldeia* Tasidadula, Dilor (Lacluta, Viqueque), tempat Guilhermino Campos dan keluarganya tinggal. Mereka membakar semua persediaan makanannya. Penduduk desa telah melarikan diri. Guilhermino Campos dan keluarganya kemudian menyerah.¹²⁶

127. Setelah Maria Alves menyerah pada 1979 ia kembali ke desanya, Bubususu (Fatuberliu, Manufahi), dan membuat rumah baru serta mempersiapkan ladang pertanian. Militer Indonesia memerintahkan keluarganya pindah ke desa lain, kemudian membakar tanaman pangannya (pepaya dan ubi jalar) dan rumahnya untuk memastikan bahwa ia pergi dan tidak kembali ke desanya.¹²⁷

128. Pada April 1976, tidak lama setelah pasukan tentara Indonesia memasuki Lautém, Batalion 502 menangkap Paulo de Jesus di Parlamento (Com, Moro, Lautém). Mereka kemudian membakar semua persediaan bahan makanan (jagung) dan rumahnya.¹²⁸

129. Pada 1976 António Soares dan pamannya, Cristovão da Costa, sedang bertugas menjaga pos Falintil di Esa-Isi (Ossu, Viqueque). Tiga orang anggota Hansip yang berpatroli di Esa-Isi menemukan mereka dan menembak mati Cristovão da Costa. Mereka kemudian membakar rumah keluarga itu, mencuri 40 ekor kerbau, 31 ekor kuda, 58 ekor kambing, dan seluruh isi lima lumbung padi.¹²⁹

130. Pada 1977, di depan mata Berteti Mauhui, anggota-anggota Hansip membakar ladang jagungnya di Hut-Manhati di Letefoho (Same, Manufahi) dan mengambil semua persediaan bahan makanan dan binatang ternaknya.¹³⁰

131. Komisi juga menerima kesaksian yang menyebutkan bahwa bahkan setelah sebagian besar penduduk sipil menyerah, tentara Indonesia terus menembaki binatang ternak dan menghancurkan tanaman bahan makanan dengan membakar atau memotong pohon buah-buahan dan mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Tujuannya adalah untuk memusnahkan pasokan makanan bagi Falintil. Tentara Indonesia menamakan operasi ini ‘curlog’ (penghancuran logistik). Praktik ini juga memengaruhi keamanan pangan penduduk sipil, karena pohon buah-buahan dan palawija adalah milik penduduk biasa yang sangat membutuhkannya untuk dapat bertahan hidup.

Penghancuran tanaman pangan oleh Fretilin

132. Komisi menerima kesaksian bahwa pasukan Fretilin/Falintil juga terlibat dalam penghancuran tanaman pangan. Bila dibandingkan dengan jumlah laporan mengenai tindakan militer Indonesia membakar dan menghancurkan tanaman pangan, yang dilakukan oleh Falintil relatif sedikit. Namun penting untuk dicatat bahwa pelanggaran semacam ini juga terjadi. Misalnya, Pastor Eligio Locatelli dari Fatumaca (Baucau, Baucau) mengemukakan kepada Komisi:

Tahun 1975-1978 ABRI dan Fretilin melakukan perusakan terhadap lahan-lahan pertanian milik penduduk sipil dan membunuh banyak hewan. Fretilin membakar tanaman penduduk dengan mengatakan bahwa kebun rakyat harus dibuat jauh dari kota, supaya mereka bisa memanfaatkan [hasilnya]. Ketika penduduk kembali ke tanah miliknya, tidak ada hewan untuk menggarap tanah. Akibatnya penduduk tidak bisa bercocok-tanam dan tetap lapar.¹³¹

Terusir oleh kelaparan dan pengeboman dari udara

133. Antara 1977 dan 1978 militer Indonesia secara sistematis menyerang *base de apoio* dengan menggunakan segala sarana yang mereka miliki untuk memastikan kehancuran akhir basis-basis itu. Penyerangan militer ini merupakan tahap terakhir Operasi Seroja yang dimulai dengan invasi penuh pada 7 Desember 1975. Militer Indonesia mengerahkan tentara dalam jumlah sangat besar untuk mengepung konsentrasi penduduk tempat pemimpin Fretilin/Falintil dan penduduk sipil yang terpindahkan telah mengungsi atau lari, dan kemudian menggunakan kekuatan senjata api yang luarbiasa besar untuk memaksa mereka takluk. Karena taktik yang digunakan militer Indonesia ini, Resistansi Timor-Leste menyebut serangan ini sebagai “pengepungan dan penghancuran” (*cerco e aniquilamento*, lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

Manufahi

134. Pada Agustus 1978 tentara Indonesia menyerang *base de apoio* yang terletak di Sektor Centro Sul di Alas, Manufahi. Serangan yang berlangsung selama tiga bulan tersebut menyebabkan banyak penduduk sipil meninggal terkena bom dan peluru, namun lebih

lagi karena kelaparan. Karena serangan tersebut berlangsung selama musim kemarau, api yang ditimbulkan oleh bom membakar sejumlah besar tumbuhan dan membakar banyak orang hingga mati. Ribuan orang terpaksa menyerah atau ditangkap, dan kemudian ditempatkan di kamp-kamp militer di Betano (Same, Manufahi), Selihasan (6 kilometer di timur kota Betano, Same, Manufahi), Uma Metan (satu kamp sementara 400 meter di utara Alas Kota, Manufahi), Lebos (satu kamp sementara di satu bukit 600 meter di baratdaya Alas Kota, Manufahi), dan kota Same.¹³²

Covalima

135. Penduduk yang terpindahkan di Covalima masih tinggal di Gunung Taroman (Fatululik, Covalima) dan Maucatar (Suai, Covalima) ketika tentara Indonesia melancarkan serangan pada September dan Oktober 1977. Pemimpin Fretilin memindahkan orang-orang tersebut ke wilayah Zoilpo/Zova yang terletak di dataran rendah di barat Lolotoe (Bobonaro). Banyak orang menyerah kepada tentara Indonesia sebelum mencapai wilayah Zoilpo/Zova dan mereka diperintahkan untuk tinggal di dekat pos militer di Beco (Suai). Ketika itu pemimpin Fretilin di Covalima bermarkas di Zuak, selatan Kota Lolotoe (Bobonaro).¹³³ Di dekatnya terdapat Bukit Zova, sekitar empat kilometer di tenggara Kota Lolotoe yang merupakan pusat pelatihan kader Fretilin. Militer Indonesia telah menduduki Kota Lolotoe namun kawasan di sekitarnya belum dikuasai. Selama perpindahan ke Zoilpo/Zova banyak orang meninggal dunia akibat serangan-serangan tentara Indonesia. Mereka yang selamat dan tidak menyerah tinggal di wilayah sekitar Zoilpa/Zova selama kurang lebih 12 bulan. Pada waktu itu tentara Indonesia tidak melakukan operasi intensif di wilayah tersebut. Helikopter dan pesawat tempur mereka sering terbang melewati mereka tanpa menyerang. Namun pasokan bahan makanan semakin menipis dan orang-orang terpaksa memakan makanan liar seperti umbi-umbian dan sagu. Kadang-kadang mereka diam-diam mengambil tanaman yang ditanam orang lain.¹³⁴

136. Ketika tentara Indonesia kembali menyerang *base de apoio*, pemimpin Fretilin memutuskan mengevakuasi penduduk ke Sektor Perbatasan Utara (*Sector Fronteira Norte*), yang terletak di wilayah Fatubessi di Ermera. Mereka memutuskan membagi penduduk menjadi dua kelompok besar. Satu kelompok menuju barat melalui Gunung Taroman dan kemudian ke utara, sedangkan kelompok yang lain pergi ke timur melalui Beco kemudian ke utara melalui Gunung Ucecai (Mape, Zumalai, Covalima). Kelompok pertama berhasil mencapai Distrik Ermera dengan berjalan kaki, tetapi kemudian ditangkap oleh tentara Indonesia dan ditempatkan di satu kamp di Fatubessi. Kelompok kedua tidak berhasil. Walaupun menjadi lemah karena lapar dan penyakit, yang telah menyebabkan banyak orang mati, mereka dapat mencapai dataran rendah di selatan Zumalai, satu wilayah yang dikenal dengan nama Halic. Mereka kemudian menyeberangi Sungai Loumea dekat Beco, tetapi pada Januari 1978, ketika mereka mendekati Sungai Mola, mereka diserang oleh tentara Indonesia.¹³⁵

137. Diperkirakan banyak orang yang meninggal dunia akibat serangan ini. Orang-orang yang selamat dari pembantaian di Sungai Mola berusaha kembali ke Halic yang masih belum dikuasai oleh tentara Indonesia. Pesawat-pesawat terbang menembaki

dan megepom para pengungsi; kapal angkatan laut menembakkan peluru meriam ke arah mereka; tembakan senapan mesin terus berlangsung sampai malam hari. Operasi tersebut berlangsung selama dua hari dan pada akhirnya sebagian besar dari para pengungsi yang masih hidup ditangkap.

Di mana-mana orang mati. Mereka mati karena kelaparan, pengeboman, dan sakit. Ada mayat-mayat yang masih memegang ubi, mangga, dan makanan, meskipun bagian-bagian tubuh mereka membusuk dan ulat-ulat keluar darinya. Tetapi kami harus mengambil dan membersihkan [makanan] dengan kain atau apapun yang ada, sehingga kami dapat memakannya, karena kami juga hanya menunggu giliran untuk mati. Tidak ada air bersih, hanya kubangan air yang di dalamnya ada bangkai kerbau dan mayat manusia. Kami harus menyaring [air] dengan kain atau sarung supaya kami bisa meminumnya.¹³⁶

138. Militer Indonesia menempatkan orang-orang yang mereka tangkap di kamp-kamp, termasuk salah satunya di Beco. Para prajurit mengawasi mereka dengan ketat. Penduduk menerima makanan dari tentara Indonesia dan dari Gereja, namun tidak cukup. Bantuan dari luar negeri masih belum sampai. Penduduk sudah lemah, dan banyak lagi yang meninggal dunia di kamp-kamp yang dikontrol militer.

Uaimori, Viqueque

139. Ketika militer Indonesia menyerang basis Uaimori pada September 1978, mula-mula penduduk mengungsi ke selatan, berjalan kaki menuju Lembah Natarbora, yang terletak di selatan Desa Umaboco (Barique, Manatuto). Banyak orang yang terbunuh ketika mereka diserang kembali selama dalam perjalanan ini. Mereka yang termasuk dalam kelompok Vemassee yang selamat dari serangan ini berbalik ke utara ke arah desa asal mereka, tetapi ditangkap oleh Hansip dan ABRI di Oosso-Ala (Vemassee, Baucau). Tentara Indonesia membawa mereka ke Bucoli (Baucau, Baucau). Cosme Freitas dari Vemassee (Baucau) mengisahkan teror dan penderitaan luarbiasa orang-orang yang melarikan diri dari serangan-serangan militer Indonesia pada 1978:

Ketika kami mengungsi dari Uaimori, penduduk mulai mati, karena kelaparan atau karena sakit. Saat kami berjalan, kematian mengejar kami. Kematian di belakang kami saat kami berjalan, dan orang-orang mati. Bukan orang-orang tua saja, tetapi anak-anak juga, karena kekurangan makanan. Orang-orang tua berjalan hingga kekuatan mereka semua habis, hanya membawa sebuah maek [sejenis umbi] atau kumbili [sejenis ubi manis]. Dan sedikit air dalam tempat terbuat dari bambu di punggung mereka. Begitulah bagaimana banyak dari kami mati. Mayat berserakan di sepanjang jalan [dari Uaimori ke Natarbora]. Yang lain meninggal karena terkena mortir, 80 hingga 100 sehari. Kami ingin menguburkan mereka, tetapi musuh terus menembaki, jadi bagaimana kami dapat menguburkan mereka? Kami lari. Seorang perempuan tua

berkata, “Tolonglah, Nak, gali lubang untuk kuburkan mayat anak saya.” Kami menggali sebuah lubang, tetapi kurang dari setengah meter dalamnya. Sebelum menurunkan malaikat kecil ini ke dalam lubang, kami membungkusnya dengan tikar dalam suara tembakan yang terus-menerus. Bagaimana kami bisa menguburkannya? Kami tundukkan kepala dan menguburkannya dengan tangan kami.

Yang bisa kami kubur, kami kubur. Kalau tidak kami tinggalkan. Bagaimana sekarang kami bisa menemukan tulang-tulang mereka lagi? Mereka membusuk begitu saja. Kami lihat tujuh atau delapan orang duduk bersandar di sebatang pohon. Mereka bersandar di pohon dan meninggal begitu saja. Lalat-lalat dan anjing-anjing mengelilingi mereka. Dalam hati kami, kami ketakutan.¹³⁷

Turiscai, Manufahi

140. Masyarakat Desa Liurai (Turiscai, Manufahi) menyampaikan kepada Komisi mengenai kehilangan yang mereka derita saat pindah dari satu tempat ke tempat lain antara 1976 dan 1979. Pengalaman mereka diringkaskan sebagai berikut:

1976: Tentara Indonesia memasuki Turiscai pada bulan Maret. Orang-orang dan tentara [kami] tinggal di Desa Liurai. Fretilin bertempur melawan ABRI di Geligili dan tiga anggota pasukan Falintil tewas. ABRI memasuki Liurai, membunuh dua anggota Falintil di Sakoko. Penduduk mengungsi ke puncak gunung, sebagian mengungsi ke Liquidoe [di Aileu], lainnya ke Orana dan Foholau [keduanya di Turiscai]. Dari yang mengungsi ke Liquidoe, 80 orang meninggal karena kelaparan dan penyakit, dan 220 orang meninggal karena kelaparan dan penyakit di Orana dan Foholau.

1977: Base de apoio Liquidoe dihancurkan. Orang-orang dari Desa Liurai yang tinggal di Lequidoe lari ke segala arah, termasuk ke Orana dan Foholau. 250 orang mati karena kelaparan dan penyakit.

1978: Pada Agustus orang-orang meninggalkan [Turiscal] untuk menuju Alas dan Fatuberliu. Lima puluh orang mati karena kelaparan dan penyakit di Besusu, Alas. Empat puluh orang mati karena kelaparan dan penyakit di Carauha (Fatuberliu).

1979: ABRI menyerang melalui darat, laut, dan udara. Orang-orang lari mengungsi dari Alas dan Fatuberliu kembali ke Sarin di Alas. Sebagian lainnya mengungsi ke Kota Turiscai (yang berada di bawah kekuasaan tentara Indonesia). Dua puluh orang mati karena kelaparan dan penyakit di Sarin; 120 orang meninggal di Turiscai.

1980-1981: Orang-orang Desa Liurai tinggal di Turiscai. Tiga perempuan (satu telah menikah, dua berumur 14 tahun) menjadi

*korban kekerasan [seksual] tentara Indonesia. Tentara Indonesia dan Hansip mengontrol anggota masyarakat yang mencari makan di Orana dan Foholau.*¹³⁸

141. Tomás Barbosa, juga dari Turiscaí, mengisahkan hari-hari terakhir *base de apoio* Sektor Centro Sul:

*Bom-bom yang mereka jatuhkan menghancurkan segalanya. Ketika kami pergi mengambil air kami tak tahu air sudah tercemar. Kami tak tahu apakah kami akan mati karena itu, atau karena kelaparan. Kami masih berusaha menolong yang lain yang tak punya makanan. Kami lari ke pantai, ke Welaluhu, lalu ke Alas. Tetapi tentara Indonesia terus datang. Kami lari ke segala arah. Di Sungai Suain saya lihat seorang perempuan yang mati mendepak bayinya di dadanya. Si bayi masih hidup dan menyusui ke ibunya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi apa yang bisa saya lakukan? Saya sakit, saya tak dapat berjalan, saya sedang menggendong anak saya sendiri. Saya harus meninggalkannya. Saya lihat orang-orang sekarat di sekitar saya.*¹³⁹

Gunung Matebian

142. Pada Oktober 1978, ketika militer Indonesia melancarkan serangan habis-habisan terhadap Gunung Matebian, puluhan ribu penduduk sipil terkonsentrasi di Gunung Matebian. Sebagian dari mereka sudah berada di sana sejak 1975. Lainnya mengungsi ke sana dari basis-basis lain yang telah jatuh; sementara yang lain diorganisasikan oleh Fretilin untuk pindah ke gunung tersebut.

143. Segera setelah tentara Indonesia menyerang Dili, orang-orang mulai mengungsi ke Gunung Matebian. Sebagian datang dari tempat yang jauh seperti Dili dan pergi ke timur karena mereka berasal dari sana.¹⁴⁰ Sebagian besar datang dari tempat-tempat yang berdekatan dan berdiam di desa-desa di lereng yang lebih rendah di gunung itu seperti Desa Lavateri di Subdistrik Baguia. Pada 1977 para pengungsi dari desa-desa lainnya diorganisasi dalam *aldeia-aldeia* baru, menurut tempat asal mereka. Jadi ada *aldeia* untuk orang-orang dari Desa Tekinomata, Samalari, dan Boleha (semuanya di Laga, Baucau) dan Gurusa, Afasa, Namanei (semuanya di Quelicai, Baucau). Orang-orang dari Dili terkesan oleh tingkat pengorganisasian yang mereka temui di Matebian. Orang-orang yang pernah tinggal di Matebian dari *aldeia* Benamauk, Camea, dan Fatuahi (Cristo Rei, Dili) mengatakan bahwa di Baguia sampai serangan akhir, ada cukup makanan dan orang-orang tidak mati kelaparan. Mereka menganggap ini merupakan keberhasilan pemimpin di zona mereka, yaitu komisaris politik Abel Larissina, dan *Adjunto* Xanana Gusmão, yang bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonomi.¹⁴¹

144. Militer Indonesia awalnya menyerang *base de apoio* di Gunung Builo (Viqueque) pada pertengahan 1977. Sejak 1976, penduduk yang pindah dari Ossu, Uatolari,

Viqueque Kota, Uato Carbau (semuanya di Viqueque), dan Baucau telah berkumpul di sana. Menurut Horacio da Silva, dalam beberapa bulan pertama setelah evakuasi ke Builo, dua atau tiga orang meninggal dunia setiap hari karena kelaparan atau penyakit. Pemimpin Fretilin memperbaiki keadaan dengan membangun kebun-kebun komunal. Tentara Indonesia menemukan lokasi tersebut dan menyerang Gunung Builo pada 1977. Banyak penduduk sipil tewas sebagai akibat langsung dari penyerangan tersebut. Horacio da Silva mengatakan kepada Komisi:

Rumah kami dibakar. Hewan ternak, kerbau, dan kuda milik kami dicuri atau dibunuh dan dibiarkan membusuk. Hasil kebun kami dibakar dan dirusak, demikian juga ladang kami. Seluruh lokasi benar-benar dihancurkan. Operasi tersebut dilakukan oleh ABRI, Hansip, dan Partisan. Banyak orang yang menyerah atau tertangkap dibawa ke kamp-kamp yang terletak di Uatolari dan Viqueque.¹⁴²

145. Yang lain lari ke Gunung Matebian, *base de apoio* terakhir di Timor-Leste. Di sana, Fretilin mengorganisasi penduduk dalam koperasi-koperasi dan membuat kebun-kebun komunal. Hasil panen disimpan di “gudang logistik” dan makanan disalurkan kepada prajurit-prajurit Falintil dan semua orang yang sangat membutuhkannya. Tetapi kondisi di Gunung Matebian tidak sebaik di Gunung Builo sehingga di Gunung Matebian lebih banyak orang yang mati karena kelaparan dan penyakit.

146. Fretilin mulai mengorganisasikan pemindahan penduduk dari Lautém ke Gunung Matebian pada 1977. Tidak semua pindah secara sukarela. Masyarakat Puno (Pairara, Moro) menuturkan kepada Komisi bahwa mereka dipaksa pindah.¹⁴³ Penduduk Iliomar adalah kelompok terakhir dari Lautém yang dipindahkan ke Matebian,¹⁴⁴ meninggalkan basis mereka di Gunung Laqumau di Subdistrik Luro pada Juni 1978, karena mereka mendengar bunyi tembakan senjata tentara Indonesia yang sedang mendekat dari arah Uato Carbau.¹⁴⁵ Setelah tiba di Matebian mereka tinggal di wilayah Lavateri. Kemudian, ketika tentara Indonesia meningkatkan serangan, mereka pindah ke tempat yang lebih tinggi dari Lavateri ke Siriafa dan dari sana mereka menuju ke puncak gunung Matebian.

147. Begitu serangan habis-habisan Indonesia terhadap Matebian dimulai, hidup di gunung itu menjadi sangat sulit (lihat Boks: Kesaksian orang-orang yang selamat dari pengeboman Matebian, di bawah). Dalam diskusi masyarakat dengan Komisi, penduduk Defawasi (Baguia, Baucau) mengatakan bahwa tentara Indonesia memagari Gunung Matebian seperti satu jerat. Pada saat pengepungan semakin ketat, orang-orang di gunung semakin memadat di satu tempat. Xanana Gusmão menulis bahwa ia mulai meragukan kearifan dari strategi mengonsentrasikan penduduk di Matebian:

Saya menyesal memindahkan penduduk ke Matebian yang secara harfiah penuh dan di mana-mana muncul persoalan antara orang yang baru tiba dengan penduduk setempat.¹⁴⁶

148. Pada saat itulah pemimpin Fretilin mengubah strateginya, membolehkan penduduk menyerah namun dengan pemahaman bahwa mereka “selalu berjuang untuk kemerdekaan: kaki dan tangan menyerah kepada musuh tetapi hati tetap untuk tanah air” (“*nafatin ukun rasik aan: liman ho ain fo ba inimigo maibe laran fo ba o-nia rain*”).

Kesaksian orang-orang yang selamat dari pengeboman Matebian

Horacio da Silva, penduduk Ossu, Viqueque, menggambarkan hari-hari terakhir orang-orang yang berlindung di Gunung Matebian. Antara 1976 dan 1977, banyak orang dari Ossu, Uatolari, Viqueque Kota, Uato Carbau, dan Baucau hidup di bawah perlindungan tentara Fretilin/Falintil di tempat yang disebut Builo. Di Builo, Fretilin menjalankan kegiatan pertanian komunal untuk memenuhi kebutuhan penduduk sipil dan angkatan bersenjata. Pada 1977 ABRI mulai melakukan serangan intensif terhadap Builo. Rakyat menyerah di Uatolari dan Viqueque, tetapi yang lain pindah ke Matebian, *base de apoio* terakhir yang bertahan melawan serangan militer Indonesia. Hari-hari terakhir di Matebian sangat sulit:

Orang-orang mati karena kelaparan atau sakit setiap hari, khususnya orang-orang tua dan anak-anak yang kurang gizi ... Angka kematian meningkat lima sampai enam orang setiap hari. Meskipun kami membuat koperasi dan mengorganisasikan penduduk untuk mengolah kebun komunal, hasilnya... disediakan terutama untuk Falintil dan orang-orang yang benar-benar memerlukannya.

Horacio da Silva mengatakan bahwa pada Oktober 1978, tentara Indonesia melancarkan serangan udara, laut, dan darat habis-habisan terhadap Gunung Matebian, yang menyasar pasukan Falintil dan penduduk sipil:

Kami lihat orang-orang mati di depan kami setelah terkena bom... Kami tunggu giliran kami mati. Juga ada orang yang mati di sumber air... dan kami harus mengambil air minum dari sana... Kami berjalan di antara mayat-mayat, bersembunyi di antara mereka, karena keadaan membuat kami kehilangan rasa takut dan mau tak mau kami harus lakukan ini.

Horacio da Silva menyampaikan kepada Komisi bahwa serangan udara berlangsung selama dua minggu tanpa henti. Serangan biasanya dimulai pada pukul tujuh pagi hari dan terus berlanjut hingga tengah hari. Kemudian ada jeda sebentar sebelum akhirnya mulai lagi lewat tengah hari dan berlanjut hingga sekitar pukul empat sore hari. Ia mengatakan,

Penduduk sipil dan tentara Falintil bercampur. Setiap hari ada 20-30 orang mati [karena] terkena bom, terkena peluru nyasar, kelaparan, dan penyakit. Orang-orang yang tidak mampu berjalan lagi ditinggalkan begitu saja di bawah pohon. Sebagian besar yang mati adalah anak-anak dan orang tua.

Sementara pengeboman dan penembakan dari laut berlanjut, tentara Indonesia mulai maju mendekati basis pertahanan Fretilin/Falintil. ABRI memaksa orang-orang menyerah dan turun dari gunung. Mereka terpaksa meninggalkan semua barang milik mereka, termasuk rumah, barang-barang pribadi, dan alat-alat yang dibakar oleh tentara Indonesia. Menurut Horacio da Silva: “Keadaan waktu itu seperti neraka.”¹⁴⁷

Leonel Guterres, yang berasal dari Quelicai (Baucau) dan sekarang bekerja sebagai petugas kesehatan, masih kanak-kanak pada masa itu dan lari ke Gunung Matebian pada awal 1976, setelah mendengar kabar bahwa tentara Indonesia telah mendarat di Laga (Baucau). Ia menyampaikan kepada Komisi:

Bahkan sebelum kami tiba di Matebian, ribuan orang telah berada di sana. Orang-orang tersebut berasal dari Baucau, Laga, Laivai, Baguia, Venilale, Lospalos, Manatuto, Viqueque, Same, dan Dili. Banyak dari mereka telah di sana selama hampir tiga tahun.

Leonel menggambarkan bagaimana agar bisa selamat, penduduk harus mengandalkan makanan yang mereka bawa sendiri, ditambah dengan umbi-umbian yang tumbuh di sekitar pergunungan. Fretilin menyelenggarakan kegiatan pertanian kolektif, menanam jagung, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Setelah dipanen, bahan makanan tersebut disimpan di tempat khusus untuk dibagikan hanya ketika diperlukan. Namun bertahan hidup sungguh sulit. Ia menjelaskan:

Setiap hari semakin banyak orang yang lapar. Kematian tak lagi dapat dihindari. Setiap hari dua atau tiga penduduk mati karena lapar dan sakit. Anak-anak dan bayi mati. Mereka tidak tahan lapar, dingin, dan harus memakan makanan yang sulit dicerna. Mereka semakin lemah karena kekurangan gizi. Tak ada makanan tambahan dan ibu-ibu tidak bisa menghasilkan cukup air susu. Setiap hari penuh kematian.

Namun, yang terburuk datang pada saat serangan terhadap Gunung Matebian dilancarkan oleh tentara Indonesia pada akhir 1978. Leonel Guterres melanjutkan:

Kami diserang bersamaan dari udara, darat, dan laut. Serangan terparah dari udara. Dalam sehari, sepuluh pesawat menggebom Matebian. Dari pukul enam pagi sampai pukul lima sore pesawat-pesawat tersebut menjatuhkan bom-bom mereka, mungkin lima

sampai 20 kali sehari. Saya tak dapat menghitung berapa ratus bom dijatuhkan di Matebian, membunuh penduduk sipil dan menghancurkan basis Falintil. Ratusan orang meninggal karena pecahan-pecahan bom. Banyak orang kehilangan anggota tubuhnya dan menjadi cacat. Mayat di mana-mana, dimakan burung pemakan bangkai. Bau kematian di mana-mana. Air tercemar dan tidak bisa diminum. Kami tidak bisa memasak, takut kalau-kalau ABRI akan mengetahui lokasi kami dari asap api. Hari-hari itu 9 hingga 11 orang meninggal setiap harinya karena kelaparan.¹⁴⁸

Francisco Soares Pinto, wakil kepala desa Cainliu (Iliomar, Lautém) mengatakan kepada Komisi:

Pada November 1978 ABRI unggul, dan kami tak dapat bertahan lebih lama lagi. Pesawat-pesawat mengebomi kami dari pagi hingga sore. Kami kehilangan sangat banyak orang di Matebian. Penduduk dari aldeia Larimin [Cainliu, Iliomar, Lautém] dihantam empat peluru mortir yang ditembakkan [kapal-kapal] Indonesia di Laga. Banyak orang meninggal. Kami sudah lemah karena kekurangan makanan, obat-obatan, dan pakaian.¹⁴⁹

Orang-orang lain yang selamat mengatakan kepada Komisi:

Kami dibombardir dari udara, dari kapal-kapal di Laga, dan oleh pasukan darat. Keadaan kami sulit, kami lari ketakutan ke kiri, lalu ke kanan. Anggota keluarga saya, Isabel Morão, meninggal setelah terkena peluru mortir.¹⁵⁰

Sejumlah orang berusaha lari ke puncak gunung. Pada Oktober - November keadaan sangat kacau. Walaupun banyak kematian dan serangan terus berlanjut, kami berusaha terus menuju puncak gunung, membawa sedikit bekal makanan yang kami miliki. Pada saat kami mencapai Lavateri, di antara Baguia dan Laga, mereka menyerang kami pada malam hari. Korban mati tak terhitung jumlahnya. Itulah yang menandai awal penghancuran Matebian pada tanggal 24 November 1978.¹⁵¹

Ketika Matebian dihancurkan, orang-orang berlarian ke segala penjuru. Kami berpisah satu sama lain, Resistansi menuju satu arah, sementara penduduk berlarian ke arah lain, masing-masing berusaha menyelamatkan diri. Sebagian memilih menyerah. Yang lain tetap melanjutkan perlawanan di dalam hutan.¹⁵²

Tentara Indonesia mengebom Matebian dari pukul 7 sampai 10 pagi, kemudian dari pukul 2 siang sampai pukul 7 malam. Mereka menysar lubang sumber air. Dalam satu hari 10 sampai 20 orang mati di dekat sumber air itu. Sebagian meninggal dunia karena kehausan. Kami juga kehabisan bahan makanan dan obat-obatan. Kami akhirnya menyerah pada 25 November 1978.¹⁵³

Setelah penghancuran basis Resistansi kami pada November 1978, para pemimpin Fretilin mengadakan pertemuan di Lavateri. Di sana kami diberitahu bahwa yang ingin melanjutkan perlawanan bisa tinggal tetapi mereka yang tidak lagi mampu melawan bisa menyerah di kota, khususnya anak-anak dan orang lanjut usia. Ketika pertemuan sedang berlangsung, ABRI kembali menyerang. Pada akhirnya Fretilin tidak lagi dapat melindungi kami. Mereka menyuruh kami menyerah.¹⁵⁴

Manatuto

149. Di Lacro, Manatuto, Manuel Carceres da Costa berbicara tentang serangan terus-menerus oleh militer Indonesia terhadap basis di Idada di perbukitan Hatuconan (Lacro, Manatuto), termasuk penggunaan pesawat tempur jelajah rendah OV-10 Bronco yang dipasok oleh Amerika Serikat:

Pada bulan Mei 1978 situasi menjadi semakin sulit lagi. Musuh mulai menyerang dari segala arah. Pada bulan Juli 1978 militer mulai mengepung dan menghancurkan kami. Banyak yang tewas ... karena mereka cedera di kaki dan tidak mampu lagi berjalan. Bayi yang baru lahir mati karena kelaparan. Mereka yang mati hanya bisa dibungkus dengan tikar dan dibiarkan begitu saja. Kami tak punya waktu untuk menguburkannya sebab musuh terus mengejar kami... Kami pindah pada malam hari dan pada siang hari kami bersembunyi karena pesawat tempur OV-10 terus mengintai kami dan menembaki serta menjatuhkan bom di atas kami, sehingga banyak teman, anggota keluarga, dan yang lain tewas... Ini berlanjut terus tanpa henti.¹⁵⁵

Alas, Manufahi

150. Saksi-saksi lain dari Manufahi memberikan kesaksian mengenai penggunaan bahan pembakar oleh ABRI untuk membakar padang rumput, sehingga memaksa penduduk lari dan membunuh mereka yang tidak dapat berlari mendahului kobaran api:

Pada 1978, musuh mulai ... mengepung Dolok [Alas]. Banyak yang meninggal karena kelaparan. Semua makanan yang dimiliki penduduk dibakar, dan sebagian ditinggalkan begitu saja oleh keluarga. Pengepungan tersebut mereka lakukan sebagai berikut: kapal perang menembak dari laut, pesawat tempur menyerang dari udara, membakar alang-alang yang kering, kemudian pasukan menyerang dari darat.

Pada saat itu musim kemarau [Agustus]. Tentara membakar alang-alang sehingga api dengan cepat membakar wilayah tersebut bagai disiram bensin. Kami yang berada dalam kepungan tidak sempat

keluar karena api begitu besar. Karena situasi begitu terjepit menyebabkan banyak orang yang tidak dapat menyelamatkan diri. Strategi ini mengakibatkan banyak orang yang tidak dapat keluar.

Penduduk bisa lari dari kepungan ketika tengah malam saat tentara Indonesia kembali beristirahat dalam kamp mereka. Sewaktu kami keluar kami tetap dihujani peluru dari kapal perang yang berada di laut. Saya menyaksikan banyak orang yang mati terbakar. Nenek saya juga terbakar, pada saat itu ia menjerit minta air untuk minum karena kepanasan, api membakar hingga rambutnya, saya hanya mampu mengikat tiga tempat air minum pada lehernya kemudian kami terus berjalan keluar tempat tersebut. Kami tidak dapat saling membantu karena situasi yang terjepit.

Setelah kami keluar, saya masih sempat melihat orang-orang tua yang ditinggal oleh keluarganya. Mereka tengah duduk. Yang laki-laki mengenakan pakaian baru, menggantungkan belak di leher mereka, dan memakai caibauk. Yang wanita mengenakan anting-anting emas dan kalung emas, memasang konde dan memakai kerudung hitam seolah-olah mau berangkat ke Gereja untuk mengikuti misa.* Kami hanya melihat keadaan mereka seperti itu dan tidak dapat berbuat apa-apa, sementara musuh masih terus mengejar kami.¹⁵⁶

Kesaksian-kesaksian lain

151. Banyak yang tidak langsung mati terkena bom dan peluru, mati karena kekurangan makanan dan obat-obatan. Komisi menerima banyak kesaksian yang menyebutkan kematian akibat kekurangan makanan dan obat-obatan pada masa itu:

- Seorang deponen, dari Cailaco (Bobonaro), lari ke hutan ketika tentara Indonesia menginjakkan kaki untuk pertama kali di Maganutu, Ritabo, yang sangat dekat dengan desanya, pada 1975.[†] Ia lari bersama ayahnya, Lae Mau, dan mereka hidup di gua batu di dalam hutan selama kurang lebih satu tahun. Pada 1977 mereka terpaksa pindah lagi, sehingga mereka lari ke Subdistrik Maubara di Liquiça di utara. Tapi, mereka kekurangan makanan. Selama tiga bulan mereka diserang terus-menerus, sehingga mereka kembali ke daerah asal. Di sana kemudian ayahnya meninggal. Ayahnya sakit dan kelaparan, dan tidak ada obat-obatan untuk menolongnya. Satu bulan kemudian sang deponen bersama orang-orang lainnya yang masih hidup menyerah.¹⁵⁷
- Duarte da Conceição tinggal di permukiman Ecinesi, di Culuhun, Leotela (Liquiça, Liquiça). Pada 1978 ia meninggalkan rumahnya karena tentara Indonesia meningkatkan serangan di kawasan Liquiça. Ia

* *Belak*: hiasan dada dari logam yang berbentuk bundar, dikenakan di leher; *caibauk*: mahkota berbentuk bulan sabit.

[†] Menurut keterangan lain yang diterima oleh Komisi, militer Indonesia belum masuk ke Cailaco hingga Juni 1976 (Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 21 September 2004).

membawa dua adik perempuannya, Martina berusia 11 tahun dan Marta berusia tujuh tahun. Ketiganya mula-mula pergi ke Tambor, kemudian ke Goumaoloa. Karena di sana tidak aman, mereka menuju Darubutlao di Maubara (Liquiça), tempat mereka tinggal selama dua hari. Mereka terus pindah dan bersembunyi di Malae Bui selama dua hari dua malam. Mereka berencana melanjutkan ke Cailaco (Bobonaro), namun dibatalkan dan mereka memutuskan pergi ke Ulukole selama dua hari. Mereka kembali ke Darubutlao di Maubara selama dua minggu sebelum mereka pindah ke Saibaidere selama sebulan dan ke Hatuhada Leten untuk tinggal dengan sanak-saudara di sana. Akhirnya mereka pindah melalui Lukubui ke Mate Hata, kembali ke Subdistrik Liquiça. Ketika mereka tiba, kedua adiknya meninggal dunia karena kelaparan dan penyakit.¹⁵⁸

- Sebagian besar orang menyaksikan kematian terjadi di sekeliling mereka baik sesudah maupun sebelum mereka menyerah. Alarico de Jesus, dari Guda Tas, Guda (Lolotoe, Bobonaro), menyampaikan kepada Komisi bahwa ia pindah bersama komunitasnya ke Gunung Sabi, tepat di selatan Guda Tas, ketika tentara Indonesia menyerang desa tetangga mereka, Deudet pada 1978. Di gunung mereka kekurangan makanan dan obat-obatan, dan akibatnya enam orang dalam kelompoknya mati. Mereka adalah Martino de Jesus, Ilimau da Costa, Ilda da Costa, Agata da Costa, Aurelia da Costa, dan João de Jesus. Pada 1979 keadaan mereka menjadi semakin sulit. Karena tidak dapat berkebun, mereka yang masih hidup menyerah di *aldeia* Raimea di Desa Opa, dekat kota Lolotoe. Di sana banyak orang dari kelompok tersebut meninggal karena kelaparan dan penyakit, termasuk Francisco, Martina, dan Salvador Fraca.¹⁵⁹

152. Orang-orang yang bersaksi kepada Komisi mengenai usaha mereka meloloskan diri dari serangan tentara Indonesia menggambarkan serangan-serangan tersebut sepertinya diarahkan kepada mereka, penduduk sipil, selain kepada pasukan Falintil. Saksi-saksi menggambarkan serangan-serangan tersebut tidak membedakan antara sasaran sipil dan militer.

153. Pada saat yang sama, strategi Fretilin yang membuat penduduk sipil tinggal bercampur dengan tentara membuat orang yang bukan petempur terkena serangan Indonesia terhadap Falintil. Fretilin akhirnya memperbolehkan penduduk sipil menyerah tetapi baru setelah Indonesia menggunakan seluruh kekuatan militernya untuk melawan mereka. Keputusan awal Fretilin mencegah orang menyerah tentu saja menempatkan mereka dalam bahaya yang besar untuk diserang oleh tentara Indonesia.

154. Tetapi, walaupun jelas bahwa sebagian orang yang ingin menyerah dicegah untuk melakukannya, kurang jelas berapa jumlah orang yang berkeinginan menyerah.

155. Menurut Jacinto Alves, pemikiran Komite Sentral mengenai masalah apakah penduduk harus menyerah mulai berubah setelah kampanye “pencegahan dan penghancuran” dimulai pada akhir 1977. Pada waktu itu diumumkan kepada rakyat bahwa perempuan, orang tua di atas 56 tahun, dan anak-anak di bawah

18 tahun boleh menyerah. Jacinto Alves mengatakan kepada Komisi mengenai reaksi terhadap pengumuman ini di wilayahnya di Manatuto, tempat 40.000 orang sedang terkena pengeboman besar-besaran:

Kami diserang dari beberapa sudut oleh infanteri TNI, termasuk penggunaan pesawat tempur dan mortir yang setiap hari membombardir kami. Selain itu, tidak ada makanan dan tanpa apa-apa... rakyat tidak mau menyerah. Disiplin 40.000 penduduk sangat tinggi. Ada imbauan untuk hanya memasak di malam hari sampai pukul 3 pagi, sesudah itu api tidak boleh menyala lagi, karena bisa menarik perhatian pesawat. Semua penduduk mengikuti imbauan itu dengan baik. Selama tiga bulan kami hidup di dalam keadaan ini dan lari berputar ... bersama 40.000 penduduk. Dan ada orang yang sudah tidak mampu berjalan karena lapar atau sudah tua, mereka mencari tempat berlindung di gua-gua dan duduk di sana sampai mati. Pada putaran kedua, mayat bertambah dan pada putaran ketiga mayat bertambah lagi, tetapi mereka tetap tidak mau menyerah.¹⁶⁰

156. Lebih jauh, ketika perintah untuk menyerah akhirnya datang, hal ini tidak selalu diterima dengan baik. Adriano João, seorang asisten politik di Sektor Centro Norte ketika perintah menyerah datang pada Februari 1979, menjelaskan reaksi rakyat terhadap keputusan tersebut:

Tanggal 16 Februari 1979 ketika kami panggil rakyat untuk memberitahu mereka bahwa kami akan menyerah, mereka semua marah. Rakyat dan Falintil merasa kecewa dan marah. Mereka acungkan senjata kepada kami. Mereka mengecam kami, "Kamu yang mengajari kami berjuang sampai mati. Sekarang tiba-tiba kepada kami kamu bilang akan menyerah." Kami beritahu mereka berkali-kali dengan sabar dan sopan, "Pemimpin-pemimpin di Fatubessi semua sudah menyerah. Jika kami tidak menyerah, kita semua akan mati di hutan karena serangan musuh dan kelaparan." Untungnya Rui Fernandes [mantan adjunto di base de apoio, yang telah menyerah bersama sebagian besar pemimpin lainnya] telah mengirimkan surat yang disampaikan kepada kami oleh João Freitas Maria, seorang komandan peleton yang telah menyerah. Saya bacakan surat itu. Mereka lihat tanda tangannya [Rui Fernandes], dan mereka setuju [untuk menyerah]. Tetapi kata mereka kepada kami, "Semua penderitaan kami di tangan musuh akan ada di bahu kamu."¹⁶¹

Pelarian di Katrai Leten dan Lesumau (Ermera)

Agustino Soares adalah seorang pemuda berusia 17 tahun ketika tentara Indonesia mencapai Letefoho (Ermera). Ia mengungkapkan kepada Komisi bagaimana ia dan keluarganya lari dari Letefoho ke Katrai Leten (Letefoho, Ermera) tempat mereka tinggal selama dua tahun dengan ribuan orang yang dipindahkan. Pada 1978 basis Resistansi ini dihancurkan, sehingga memaksanya untuk melanjutkan pelarian, hingga akhirnya ia menyerah di Letefoho Kota. Ia mengatakan kepada Komisi:

Tentara Indonesia masuk ke Letefoho pada tanggal 3 Mei 1976. Batalion 512 [ABRI] datang dari arah Gunung Baumalaria. Setelah mereka memasuki Letefoho, keadaan semakin buruk. Mereka menyerang dan membunuh, serta melakukan operasi di desa-desa untuk menangkap orang. Penduduk menjadi ketakutan dan mengalami trauma. Sebagian besar penduduk mengungsi ke hutan, termasuk saya dan keluarga saya.

Pada waktu itu saya berusia 17 tahun. Kami tinggal di Katrai Leten di kaki Gunung Ramelau. Ada sepuluh orang lagi dalam keluarga kami. Ribuan orang berkonsentrasi di Katrai Leten. Mereka berasal dari Letefoho, Ermera, Ainaro, Aileu, dan Cailaco. Katrai Leten adalah kubu Fretilin, jadi kami agak aman. Tentara Fretilin melindungi kami dari depan, sedangkan di belakang kami bercocok tanam. Pada mulanya kami mempunyai cukup makanan. Tidak ada orang yang mati karena lapar atau sakit.

Kira-kira dua tahun kemudian tentara Indonesia bergerak menuju wilayah Katrai Leten. Tentara Indonesia datang dari Atsabe, Ainaro, Same, dan Bobonaro. Mereka mengepung Katrai Leten. Kami terkepung dan mereka menembaki kami dengan mortir, bazooka, dan meriam. Pesawat tempur mereka membombardir kami dari udara. Bom tidak membakar manusia, tetapi ranjau darat banyak membunuh orang. Serangan pada tanggal 18 Mei 1978 merusak basis di Katrai-Leten tempat kami berkumpul. Saya dan keluarga saya berhasil lolos dari pengepungan dengan sejumlah orang lainnya, meskipun ABRI memblokir semua jalan keluar. Orang-orang yang tidak berhasil meloloskan diri ditangkap oleh tentara Indonesia dan dibawa ke Letefoho Kota, sedangkan kami melarikan diri ke daerah Lesemau.

Di Lesumau kami tidak dapat bercocok tanam karena musuh selalu menyerang kami. Kami merasa sangat sulit memperoleh bahan makanan dan banyak yang mulai meninggal karena kelaparan. Saya memperkirakan sekitar 10-11 orang meninggal setiap hari karena kelaparan. Mayat mereka dibiarkan begitu saja di tanah. Ketika

kami keluar pada malam hari untuk mencari makanan, kami pasti menginjak mayat secara tidak sengaja. Di kanan kiri, satu atau dua mayat tergeletak di tanah. Dalam keadaan yang genting seperti itu, kami berhasil selamat dengan mengubah pola makan kami. Kami berusaha makan hanya satu kali sehari dan banyak minum air agar perut kami kenyang. Kami memasak dengan mencampur berbagai jenis makanan. Kami hanya mengambil sedikit biji jagung dan mencampurnya dengan daun-daunan dan sayur-sayuran dari hutan seperti ortalaun tahan [daun mint] dan angriaun [selada air]. Inilah yang kami makan sehingga bisa bertahan hidup.

Segera setelah itu, Lesemau diserang lagi oleh tentara Indonesia. Karena sebagian orang ketika itu sedang memasak, asap terlihat oleh pesawat tempur musuh dan akibatnya basis kami dibombardir. Tetap kali ini bukan bom yang dijatuhkan tetapi racun yang dicampur dengan air yang mereka siramkan dari udara. Bom beracun ini mencemari semua persediaan makanan kami. Jika penduduk mengambil daun-daunan liar untuk dimakan, jika daun ini dimasak dan dimakan maka mereka mati. Mereka juga mati karena meminum air. Mereka bahkan mati setelah memakan umbi yang dimasak yang digali dari kedalaman 15 sentimeter di bawah permukaan tanah. Sekitar 400 orang mati karena bom beracun, sebagian besar orang yang berasal dari aldeia Katrai Craik. Semua orang aldeia itu tewas. Yang selamat hanyalah seorang nenek dan cucu perempuannya. Mereka kini masih hidup di Catrai Craik.

Setelah pengeboman beracun kami pindah lagi, dari Lesemau ke Hatu Lete [Katrai Craik], begitu kami tiba di Hatu Lete, kami mulai memasak daun taro, namun sebelum kami sempat memakannya, kami ditangkap oleh anggota Batalion 512 dan Hansip. Kami dipukuli dan dibawa ke Letefoho Kota dan ditempatkan di satu kamp konsentrasi tempat kami tinggal selama satu bulan. Kami banyak mengalami penderitaan karena kekurangan makanan dan obat-obatan, disiksa, dan diinterogasi. Karena saya tidak tahan maka saya melarikan diri ke hutan dan tinggal di Katrai Leten. Tetapi mereka kembali menangkap saya pada bulan Maret 1978 dan saya dibawa kembali ke Letefoho Kota.¹⁶²

Menyerah, kamp, dan kelaparan (1978-1981)

157. Kesaksian pada Komisi menunjukkan bahwa operasi militer Indonesia antara 1977 dan 1978 untuk menguasai daerah-daerah yang belum tunduk pada kekuasaan Indonesia membuat orang-orang yang tinggal di tempat-tempat tersebut mustahil bertahan. Menyerah atau mati merupakan satu-satunya pilihan bagi kebanyakan orang. Apakah dalam kelompok kecil yang berpindah-pindah untuk menghindari serangan

atau kah dalam kelompok besar yang terkepung dan mengalami pengeboman gencar, sebagian besar yang masih hidup akhirnya menyerah atau tertangkap.

158. Kebijakan Fretilin menentang penyerahan penduduk sipil yang tinggal di basis-basis Resistansi akhirnya tidak lagi bisa dipertahankan. Penduduk sipil berada dalam situasi yang sangat berbahaya; mereka tidak dapat lagi dilindungi atau didukung oleh Resistansi. Keberadaan mereka membuat kekuatan Falintil yang telah melemah terancam kehancuran total. Menurut kesaksian yang diterima oleh Komisi, pada pertemuan di Werou pada 20-28 November, Komite Sentral Fretilin membuat perubahan kebijakan besar dengan memutuskan bahwa penduduk sipil harus didorong untuk menyerah. Fretilin/Falintil akan melanjutkan perang tetapi akan mengubah strateginya dari perang konvensional menjadi perang gerilya.¹⁶³ Pemimpin Fretilin yakin bahwa rakyat kemungkinan besar akan selamat jika mereka menyerah dan berharap bahwa mereka akan menjadi sumber dukungan, makanan, dan informasi dari dalam wilayah yang dikuasai oleh tentara Indonesia.

159. Taur Matan Ruak, yang saat itu adalah seorang komandan kompi, menggambarkan perubahan kebijakan ini kepada Komisi:

Banyak basis telah jatuh, dan banyak penduduk telah menyerah dan banyak pemimpin yang mati. Pasukan kami tercerai-berai, dan banyak dari mereka yang juga menyerah. Lalu keputusan diambil untuk mengubah strategi. Meskipun kami dikepung musuh, diputuskan memberi perintah meneruskan perang dan menyingkir dari wilayah basis. Pertama penduduk yang ingin menyerah harus menyerah, tetapi mereka harus dibimbing oleh pemikiran berikut, "Apakah di sawah, di ladang jagung, ataukah di kota atau di desa, setiap orang harus melanjutkan perjuangan untuk kemerdekaan menurut kemampuan masing-masing."¹⁶⁴

160. Mario Nicolau dos Reis, yang saat itu adalah seorang asisten politik di basis Uaimori, mengisahkan bagaimana ia menjelaskan perubahan kebijakan kepada penduduk sipil di basis:

Pada waktu itu banyak orang turun dan menyerah atau tertangkap. Secara fisik tidak mungkin hidup di hutan. Saya bilang kepada mereka, "Sebelum saya perintahkan kalian meninggalkan kota, sekarang saya beritahu kalian untuk kembali... Jika kalian masih ingin bertempur, kalian tidak harus melakukannya dengan tetap di sini. Kalian dapat lakukan dari dalam kota. Kalian tidak perlu pakai senjata di kota. Itulah sebabnya mengapa kalian harus menanam tanaman pangan... dan menjaganya baik-baik dari monyet dan babi, sehingga kalian dapat berikan hasil panen kalian kepada [Falintil]. Jika kalian mau, kalian dapat berikan beras kepada Falintil. Kalian tak akan diganggu oleh tentara, sehingga hasilnya dapat kalian panen dari sawah. Ini cara yang dapat bermanfaat. Kamu bisa turun... sehingga kita dapat memperpanjang perang ini." Setelah pertemuan... banyak yang turun.¹⁶⁵

Menyerah: persebaran dan jumlah

161. Sulit menghitung jumlah orang yang masuk ke kamp-kamp yang dikuasai oleh Indonesia setelah mereka menyerah atau tertangkap. Sebuah pengkajian yang terperinci atas persoalan ini tidak lama setelah kejadian, berdasarkan laporan dan penghitungan jumlah penduduk yang bersumber dari Pemerintah Indonesia dan badan bantuan internasional serta dari sumber Gereja Katolik Indonesia dan Timor-Leste, menyimpulkan bahwa antara 300.000 dan 400.000 orang terpindah masuk ke dalam kontrol Indonesia antara awal 1977 dan awal 1979.¹⁶⁶

162. Pernyataan-pernyataan kesaksian kepada Komisi menunjukkan bahwa penyerahan atau penangkapan penduduk terjadi pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda di Timor-Leste. Angka yang dikumpulkan oleh kepolisian Indonesia pada Juni 1978, yang menunjukkan jumlah penduduk yang berada di bawah kontrol Indonesia di setiap distrik antara Oktober 1977 dan Mei 1978, memberikan penegasan empiris atas kesaksian ini (lihat Tabel 5: Data kepolisian Indonesia tentang jumlah penduduk, Oktober 1977-Mei 1978, di bawah).

Tabel 5: Data kepolisian Indonesia tentang jumlah penduduk, Oktober 1977 - Mei 1978

| Daerah | Penduduk Timor-Leste | | | | | | | | | Informasi |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | Pra-invasi | Okt 77 | Nov 77 | Des 77 | Jan 78 | Feb 78 | Mar 78 | April 78 | Mei 78 | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] |
| Dili | 28.149 | 35.541 | 35.233 | 35.233 | 35.209 | 33.733 | 33.834 | 33.618 | 37.818 | |
| Baucau | 84.626 | 31.891 | 33.727 | 33.751 | 35.189 | 35.194 | 35.200 | 35.513 | 36.000 | |
| Lospalos (Lautém) | 38.797 | 11.575 | 11.881 | 13.064 | 13.064 | 13.064 | 13.101 | 13.738 | 13.844 | |
| Viqueque | 62.685 | 12.269 | 12.736 | 12.736 | 12.751 | 12.751 | 12.951 | 12.994 | 12.994 | |
| Manatuto | 35.885 | 12.755 | 12.826 | 12.829 | 12.829 | 12.829 | 12.829 | 13.175 | 13.250 | |
| Aileu | 33.033 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.762 | 1.772 | |
| Ainaro | 49.644 | 22.209 | 41.296 | 41.296 | 41.297 | 41.729 | 41.794 | 41.794 | 41.794 | |
| Same (Manufahi) | 35.327 | 6.369 | 12.551 | 19.346 | 14.114 | 14.114 | 14.115 | 17.283 | 17.023 | |
| Suai | 40.655 | 19.392 | 23.202 | 23.202 | 27.730 | 27.730 | 27.730 | 27.714 | 27.741 | |
| Maliana (Bobonaro) | 75.159 | 59.392 | 59.957 | 59.957 | 20.709 | 61.316 | 61.316 | 61.316 | 67.946 | |
| Ermera | 70.294 | 47.661 | 47.670 | 47.670 | 49.021 | 49.281 | 49.281 | 50.507 | 51.078 | |
| Liquiça | 49.798 | 6.105 | 6.106 | 6.126 | 5.127 | 5.127 | 5.128 | 5.234 | 5.234 | |
| Oecussi | 22.673 | 35.399 | 35.399 | 35.399 | 35.979 | 35.979 | 35.979 | 36.392 | 36.392 | |
| Jumlah | 626.725 | 301.868 | 333.894 | 341.919 | 304.569 | 344.397 | 344.808 | 351.040 | 362.886 | 0 |

163. Walaupun angka-angka ini harus disikapi dengan hati-hati,^{*} mereka memberikan petunjuk tentang kenaikan jumlah penduduk yang berada dalam kontrol langsung Indonesia pada periode tersebut—sekitar 60.000. Adalah masuk akal apabila peningkatan jumlah penduduk ini dikaitkan dengan penyerahan penduduk karena sebagian besar penambahan tersebut terjadi dalam kurun waktu singkat di distrik-distrik tertentu: Ainaro (November 1977), Manufahi (Oktober - Desember 1977), Covalima (Oktober 1977-Januari 1978), Bobonaro (Mei 1978), dan Dili (Oktober 1977 dan Mei 1978). Lebih lanjut, waktu terjadinya peningkatan jumlah penduduk di distrik-distrik tertentu yang diperlihatkan pada tabel tersebut kurang lebih sejalan dengan apa yang diketahui mengenai jumlah penduduk yang menyerah pada periode ini.

164. Bila dibandingkan dengan angka sebelum invasi, jumlah penduduk yang relatif kecil yang berada di bawah kontrol Indonesia di distrik-distrik bagian timur seperti Viqueque, Lautém, dan Baucau patut dicatat. Ini sesuai dengan kenyataan bahwa penyerahan besar-besaran di distrik-distrik tersebut tidak terjadi hingga paruh kedua 1978 (yakni, setelah periode yang dicakup oleh tabel).

165. Angka Mei 1978 untuk distrik bagian barat, Bobonaro dan Covalima, dan distrik bagian tengah, Ainaro, serupa dengan angka yang tercatat di dalam sensus resmi Indonesia pada 1980.¹⁶⁷ Ini menunjukkan jumlah penduduk yang relatif stabil di distrik-distrik tersebut sejak pertengahan 1978 dengan hanya sedikit orang yang menyerah sesudah itu. Sebaliknya, perbandingan angka untuk banyak distrik bagian tengah dan semua distrik bagian timur dari Tabel 5 dan sensus 1980 menunjukkan bahwa banyak penduduk yang masih berada di luar kontrol Indonesia di wilayah-wilayah tersebut pada pertengahan 1978. Perbandingan sederhana antara angka kepolisian pada 1978 dan sensus 1980 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berada di luar kontrol Indonesia pada pertengahan 1978, di semua distrik, adalah sekitar 200.000 jiwa (Mei 1978: 362.886; 1980: 555.350), namun mungkin lebih besar.[†]

166. Singkatnya, operasi militer Indonesia pada 1977 dan 1978 menghasilkan meningkatnya kontrol Indonesia terhadap penduduk. Penyerahan terjadi secara bergelombang selama berbulan-bulan di wilayah yang berbeda-beda. Setiap operasi militer yang baru menyebabkan sebagian penduduk menyerah, sementara yang lain pindah untuk menghindari penyerahan. Kadang-kadang orang yang telah menyerah kembali lagi ke pergunungan.

* Komisi tidak tahu bagaimana angka-angka ini diperoleh; jumlah yang sama dalam beberapa bulan di sejumlah distrik membuat ketepatannya dari bulan ke bulan diragukan; angka yang sangat rendah untuk Distrik Aileu dan Liquiça memerlukan penjelasan.

† Perbandingan sederhana antara penghitungan jumlah penduduk pada 1978 dan 1980 mungkin menghitung terlalu rendah jumlah penduduk di luar kontrol Indonesia karena dua alasan. Pertama bukti di hadapan Komisi menunjukkan bahwa angka kematian di Timor-Leste karena pembunuhan, penyakit, dan kelaparan sangat tinggi dari pertengahan 1978 hingga akhir 1979. Angka kematian yang tinggi ini berarti bahwa jumlah penduduk yang masih di luar kontrol Indonesia pada pertengahan 1978 tinggi, tetapi tidak dapat dihitung, lebih daripada 200.000. Kedua, ada alasan yang kuat untuk menganggap bahwa sensus 1980 terlalu rendah memperkirakan jumlah penduduk sebenarnya dalam tahun itu [lihat Bagian 6: Profil Pelanggaran hak asasi manusia].

167. Perpindahan penduduk dalam jumlah besar masuk ke pusat-pusat yang dikontrol Indonesia terus berlanjut hingga akhir 1978. Angka dari militer Indonesia, yang dikutip oleh seorang pastor Indonesia yang berkunjung ke Timor-Leste pada awal 1979, mengindikasikan sebanyak 320.000 “pengungsi” telah pindah dari pedalaman pada awal Desember 1978.¹⁶⁸ Laporan-laporan dari sumber gereja dan sumber diplomatik pada waktu itu mengisyaratkan bahwa arus perpindahan penduduk ini sangat berkurang pada paruh pertama 1979.¹⁶⁹

Hidup dan mati di kamp yang dikontrol Indonesia

168. Orang Timor-Leste yang menyerah atau tertangkap biasanya ditahan dalam waktu lama di pusat pengendalian penduduk yang sering disebut oleh penduduk setempat sebagai ‘kamp konsentrasi.’ Pada saat menyerah, penduduk sering ditahan dalam jangka waktu relatif pendek di kamp-kamp transit, yang biasanya merangkap sebagai basis militer, khususnya untuk memisahkan para pemimpin Fretilin atau Falintil dan tentara Falintil dari massa penduduk sipil. Proses ini juga terjadi di tempat-tempat yang disebut ‘kamp permukiman kembali’ dan desa relokasi tempat penduduk mengalami berbagai bentuk pembatasan selama beberapa tahun.

169. Pertimbangan keamanan dan pencapaian tujuan militer, dan bukan kesejahteraan orang-orang yang ditahan di dalamnya, merupakan prioritas militer Indonesia di kamp-kamp ini. Harapan bahwa penduduk sipil, banyak di antaranya mengalami kelaparan dan dalam kondisi lemah, dapat diselamatkan dari kematian dengan menyerah ternyata terbukti salah. Bukti yang dikumpulkan oleh Komisi menunjukkan bahwa militer Indonesia gagal menjamin kebutuhan dasar orang-orang yang menyerah dan bahwa tanpa akses terhadap tempat berlindung, makanan, air bersih, dan kesehatan yang memadai di kamp-kamp yang dikontrol tentara, ribuan orang meninggal dunia.

Kamp penampungan sementara

170. Setelah menyerah atau tertangkap, warga Timor-Leste pertama-tama ditempatkan di kamp transit. Kamp-kamp transit ini, yang biasanya dibangun di atau dekat lokasi-lokasi militer Indonesia, terletak di luar kota dan di ibukota subdistrik. Walaupun Komisi tidak dapat menyusun daftar lengkap, terdapat lusinan kamp penampungan sementara di Timor-Leste pada periode 1977-1979. Setiap operasi militer Indonesia skala besar yang baru selalu ditandai dengan pendirian kamp penampungan sementara yang baru. Setelah didirikan, kamp transit dijalankan sampai satu tahun dan orang-orang terus mengalir masuk ke dalamnya, menggantikan orang-orang sebelumnya yang telah dipindahkan ke tempat lain.

* Istilah tersebut sering digunakan dalam kesaksian kepada Komisi. Siaran langsung radio Fretilin dari Timor pada 1977 dan 1978 juga menggunakan frasa ini untuk menerangkan tempat-tempat yang dijadikan lokasi penahanan penduduk yang ditangkap (lihat misalnya ringkasan pesan Radio Maubere 10 Juli 1977, di *Timor Information Service*, No.22, Desember 1977, hal.4; Siaran Radio Maubere, 14 Mei 1978, di *Timor Information Service*, No.26, Agustus 1978, hal.18).

Kelaparan dan kematian

171. Indonesia hanya melakukan sedikit persiapan untuk menampung dan melindungi para pengungsi yang jumlahnya sangat banyak, yang sebagian besar dalam keadaan lemah dan kurang makan. Sebagian hampir tidak dapat berjalan dan digambarkan oleh para pengamat sebagai “tengkorak hidup”.¹⁷⁰ Gilman dos Santos, yang saat itu bekerja untuk lembaga Amerika Serikat Catholic Relief Service (CRS) mengingat kondisi menyedihkan orang-orang yang baru turun dari gunung untuk menyerah. Dia bercerita kepada Komisi:

Pada 1978 situasi makanan di hutan makin sulit, karena militer Indonesia lebih mengawasi wilayah hingga desa-desa terpencil. Masalah makanan ini diiyakan oleh pernyataan mereka yang turun gunung. Mereka sangat kurus dan sakit...Orang-orang Indonesia melakukan upaya minimal untuk membantu memulihkan situasi ini ...Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa kebanyakan orang-orang yang sakit di kamp-kamp, mati.¹⁷¹

172. Barak-barak darurat dibangun dengan tergesa-gesa dengan atap daun palem, tetapi tanpa fasilitas kakus. Setelah tiba di kamp orang-orang biasanya diberi sedikit makanan. Sering makanan ini tidak cocok bagi orang-orang yang lama kekurangan gizi dan akibatnya banyak dari mereka yang memakannya, meninggal. Kematian seperti itu membuat banyak orang yakin bahwa mereka diracun oleh militer. Pengakuan saksi lebih lanjut menunjukkan bahwa jumlah makanan yang disediakan pada umumnya tidak memadai. Ransum untuk satu keluarga selama satu minggu sering hanya satu atau dua rantang, yang hanya cukup untuk satu orang dengan satu atau dua kali makan. Menanam atau mencari makanan tambahan adalah tidak mungkin karena terbatasnya gerakan mereka keluar dari kamp dan keadaan fisik penghuni yang sangat lemah. Akibatnya banyak yang meninggal karena kelaparan pada saat berada dalam kontrol Indonesia di kamp-kamp, ini.

173. Pastor Eligio Locatelli sudah tinggal di Kolese Teknik Salesian di Fatumaca, Gariuai (Baucau, Baucau) sejak zaman Portugis. Ia menuturkan kepada Komisi:

Masyarakat menyerah dari gunung tahun 1978-1982. Awalnya mereka harus tinggal tiga bulan di pos penyerahan ABRI di Baucau dan Uailili. Sesudah tiga bulan orang boleh kembali ke tempat asalnya, tetapi tidak boleh tinggal jauh dari pinggir jalan. Pos penyerahan ini berlaku selama satu tahun. Mereka [orang-orang] diawasi dengan ketat dan terkurung dalam satu wilayah. Mereka tidak boleh ke luar mencari makanan dan air bersih.

Mereka diberi bantuan dari tentara. Tetapi mereka hanya menerima makan satu kali sehari, biasanya ikan asin dan jagung lapuk (busuk). Untuk ke luar mencari makanan, harus ada izin, yang diketahui kepala desa, camat, koramil, dan kodim. Meski dengan surat ini orang masih takut. Ke luar bisa mati, tetap di dalam kurungan juga akan mati. Banyak orang meninggal.¹⁷²

Penduduk Vemasse jatuh ke tangan Indonesia¹⁷³

Ketika pertahanan Uaimori jatuh pada 1978, penduduk pindah secara bertahap ke dataran Natarbora di pantai selatan Manatuto. Banyak orang yang meninggal dalam perjalanan dari Uaimori ke Natarbora, dan lebih banyak lagi yang meninggal pada saat Indonesia membombardir basis Resistansi di Natarbora. Sekelompok orang yang lolos dari pengepungan di Natarbora berhasil mencapai Osso Ala (Vemasse, Baucau), tempat mereka ditangkap oleh tentara Indonesia. Berikut penuturan Cosme Freitas mengenai perlakuan terhadap mereka setelah ditangkap:

Pada tahun 1978, ABRI dan Hansip menangkap sekitar 120 dari kami di Osso Ala. Mereka membawa kami ke Venilale [Baucau] dan kemudian memerintahkan kami berjalan dari sana ke Desa Bucoli [Baucau]. Kami berjalan lebih dari dua hari. Selama tiga bulan di kamp konsentrasi Bucoli, kami menghadapi berbagai kesulitan; kami tidak diperkenankan keluar kamp untuk mencari makanan dan air bersih, atau untuk mandi. Kami dipaksa untuk hanya duduk di sana [di dalam kamp].

Karena adanya pembatasan ABRI, kami sangat kekurangan gizi, karena tidak diberikan kesempatan keluar mencari makanan. Kami hanya diberikan jagung yang berjamur oleh ABRI, tiga rantang per keluarga per minggu. Tapi kami hanya menghabiskan ketiga rantang jagung rusak tersebut dalam satu hari. Jika jagung rusak tersebut habis maka kami tidak lagi mempunyai makanan yang tersisa. Jadi kami harus menunggu minggu berikutnya untuk mendapatkan ransum. Hal itu menyebabkan banyak kematian karena kelaparan di kamp konsentrasi. Diperkirakan 1-3 orang meninggal setiap hari. Mereka yang meninggal dikuburkan oleh keluarga tempat mereka tinggal. Mereka yang makan jagung terserang beri-beri dan kolera. Saya memperkirakan sekitar 2-4 orang meninggal setiap hari karena penyakit tersebut, kadang-kadang lebih. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan orang tua.

Setelah tiga bulan, tentara Indonesia mulai memindahkan kami dari Bucoli ke Vemasse. Ketika kami tiba di Vemasse tentara menurunkan kami di depan gereja Vemasse. Mereka meminta kami agar diam di dalam gereja. Kami tinggal di gereja selama lebih kurang dua minggu sebelum kami diizinkan pindah kembali ke rumah kami.

Kembali ke rumah lama, namun kami tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah setempat di Baucau, ABRI, pihak gereja, atau lembaga internasional. Jadi kami mengalami kelaparan yang

parah. Sejak kami kembali ke Vemasse, kami belum punya waktu untuk menanam tanaman. Banyak orang yang kelaparan, sebagian bahkan mati kelaparan. Untuk bisa bertahan hidup, apabila tidak ada makanan, semua penduduk Vemasse pergi memetik daun anggur muda, yang kemudian dimasak untuk seluruh anggota keluarga. Hal ini berlanjut selama sekitar dua minggu, yang menyebabkan banyak orang yang menderita beri-beri, kolera, dan muntah-muntah. Mereka tidak hanya sakit namun banyak yang meninggal. Diperkirakan sekitar 10-11 orang meninggal setiap hari karena penyakit, kebanyakan orang tua dan anak-anak. Jadi, jumlah orang yang meninggal selama periode dua minggu [dengan memakan daun anggur muda] diperkirakan sekitar 150 orang.

Hanya pada tahun 1981 kami menerima bantuan dari CRS. Mereka membagi beras, jagung, kacang-kacangan, tepung jagung, obat-obatan, pakaian, dan sabun, jadi hidup kami menjadi agak lebih baik. Tentara Indonesia juga mulai memberikan kami kebebasan untuk keluar bercocok tanam atau mengerjakan sawah, sehingga jumlah orang yang meninggal karena kekurangan makanan menjadi berkurang.

Registrasi, interogasi, eksekusi, dan kontrol

174. Warga sipil yang menyerah biasanya ditahan di kamp penampungan sementara selama beberapa minggu, di mana setelah tiba, mereka didaftar dan diinterogasi. Interogasi dirancang untuk mengidentifikasi setiap anggota resistansi dan untuk mendapatkan informasi mengenai gerilyawan yang masih berada di gunung-gunung. Mereka yang diyakini sebagai anggota Fretilin atau Falintil kadang-kadang langsung dieksekusi. Yang lain diinterogasi dan disiksa untuk jangka waktu lama sebelum akhirnya dieksekusi. Tampaknya, proses penyaringan resminya menjadi tanggung jawab cabang komando militer yang disebut Komando Taktis (Kotis), namun kesaksian yang diberikan kepada Komisi menunjukkan bahwa hampir semua tentara dari hampir semua unit militer—Kodim atau Koramil, batalion tempur, atau Pasukan Khusus (Kopassandha)—ternyata bisa melakukan proses penyaringan yang dibantu orang Timor. Sementara itu juga, yang lain dibawa ke pusat penahanan di tempat lain untuk diinterogasi oleh badan intelijen lain. Banyak dari mereka juga dieksekusi. Sebagian diizinkan untuk pindah ke kamp permukiman kembali dengan rakyat sipil lainnya. (Lihat 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; dan 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan.)

175. Sebagian warga sipil atau anggota gerilyawan yang menyerah dipaksa kembali ke gunung untuk membujuk keluarga atau rekan mereka untuk menyerahkan diri. Mereka menghadapi risiko akan dibunuh oleh Falintil yang dianggap sebagai mata-mata, atau oleh ABRI jika mereka gagal menjalankan misi. Moises da Costa menceritakan kepada Komisi bagaimana keluarganya lari pada 1978 ke We Alas

[Alas, Manufahi] dan kemudian ke Kolokau (juga di Alas) sebelum ayahnya ditangkap dan dibawa ke kamp penyerahan Uma Metan. Ayahnya dipaksa kembali ke Kolokau untuk membujuk keluarganya untuk menyerah namun dibunuh oleh Falintil karena dicurigai sebagai mata-mata.¹⁷⁴ Istri Francisco Ximenes [Amelia do Rego] menyampaikan kepada Komisi bagaimana tak lama setelah ia dan suaminya turun dari gunung, komandan Linud 100, Handoko, datang ke rumahnya di Caicasa, Fatuberliu, dan memerintahkan Francisco pergi ke hutan mencari rekan-rekannya yang dulu. Sekembalinya, ia berkata bahwa ia tidak dapat menemukan mereka. Anggota Linud 100 kemudian mengikatnya dan memukulnya hingga hilang kesadarannya, lalu menembaknya mati.¹⁷⁵

Kewajiban berdasarkan hukum hak asasi manusia dan hukum perang

Hukum tentang hak asasi manusia, yang berlaku baik dalam situasi damai atau pada saat konflik bersenjata, juga memberikan perlindungan penting bagi pengungsi internal (IDP). Hukum ini bertujuan mencegah pemindahan dan menjamin hak-hak dasar apabila hal ini terjadi. Hak atas keselamatan pribadi dan tempat tinggal, dan juga hak atas makanan, perlindungan, pendidikan, dan akses untuk bekerja memberi perlindungan penting bagi orang-orang terpinggirkan.

Bilamana penduduk sipil mengalami kekurangan pasokan dasar agar bisa bertahan hidup, pihak-pihak yang bersengketa berkewajiban menerima operasi bantuan kemanusiaan, yang tidak memihak dan tidak diskriminatif atas nama penduduk yang dimaksud. (Konvensi Jenewa IV, Pasal 38 dan 59; Protokol Tambahan I atas Konvensi Jenewa, Pasal 70; Protokol Tambahan II atas Konvensi Jenewa, Pasal 18).

Kamp transit: Data terperinci yang diterima oleh Komisi

176. Tome da Costa Mangalhães menguraikan pengalamannya secara gamblang di dalam kamp transit dan permukiman kembali yang terkenal buruk yang disebut Uma Metan (Rumah Hitam) di Alas, Manufahi:

Kami tinggal di Uma Metan selama tiga bulan. Di sana saya melihat banyak penduduk sipil sekitar 8.000 yang dikonsentrasikan di sana. Mereka berasal dari Aileu, Maubisse, Same, Ainaro, Manatuto, Dili, Liquiça, dan Viqueque. Mereka sangat menderita karena lapar, sakit, dan tidak ada pakaian. Selama tiga bulan di sana, kami tidak diperbolehkan keluar dari batas antara satu sampai dua kilometer,

karena mereka mencurigai kami melakukan kontak dengan Fretilin. Di Uma Metan tidak ada air minum. Sumber air berada jauh dari sana sekitar 500 meter. Untuk mengambil air harus diantar oleh petugas hansip dan tentara, dan hanya orang-orang yang masih kuat saja yang bisa kembali lagi ke tempat semula; yang tidak kuat bisa meninggal di jalan dan dibiarkan saja di sana di tempat-tempat yang terjal. Kami diberi makanan tetapi hanya jagung sebanyak satu kaleng kecil sebesar susu-enak untuk satu orang selama satu minggu. Karena itu kami hanya bisa masak sebanyak satu genggam tangan untuk dua hari. Karena itu banyak orang yang tidak tahan lapar dan akhirnya antara 5-6 orang meninggal dalam satu hari karena lapar. Dan mereka yang makan jagung yang sudah rusak akhirnya kena berbagai penyakit seperti kaki dan tangan bengkak, sakit perut, dan TBC. Begitu kena sakit tidak lama kemudian meninggal. Tentara tidak memberi obat untuk mengobati orang-orang yang sakit dan mati setiap hari. Siapa saja yang masuk di sana hampir bisa dipastikan bahwa akan meninggal, kecuali nasibnya beruntung. Tentara memang sengaja menghukum orang-orang siang dan malam dan tidak memperbolehkan mereka keluar untuk mencari makanan, mengambil air, dan mencari kayu bakar. Tentara juga tidak memberi makan orang, mengobati orang yang sakit, karena itu orang meninggal karena kelaparan, kehausan, dan penyakit, sehingga selama satu minggu jumlah orang yang meninggal bisa sampai 40 orang.¹⁷⁶

177. Berikut ini adalah sebagian laporan kepada Komisi tentang hidup di dalam kamp segera setelah penyerahan diri.*

Baguia (Baucau)

178. Setelah penyerangan terhadap Gunung Matebian pada 24 November 1978 ribuan orang mulai turun menuju Kota Baguia (Baguia, Baucau). Mereka yang menyerah di Kota Baguia mencakup orang-orang dari Iliomar, Lospalos, Luro, Tutuala (semua di Lautém), dari Laga dan Baucau (di Baucau), dan dari Distrik Viqueque, juga orang-orang dari Subdistrik Baguia. Ketika mereka tiba di Baguia, satu-satunya tempat bernaung yang mereka temukan adalah di bawah pohon dan semak-semak. Mereka tidak diperkenankan keluar dari kota melebihi jarak yang ditetapkan dan mereka dijaga dengan ketat. Kondisi ini dan jumlah penduduk yang begitu besar orang-orang yang berkumpul di dalam kota membuat warga yang sudah lemah mudah terjangkit berbagai macam penyakit menular, seperti kolera, diare, dan TBC. Akibatnya, menurut satu komunitas yang menyerah di Baguia, dari desa mereka saja meninggal sekitar 500 orang di sana.¹⁷⁷ Komunitas lain melaporkan pengalaman yang serupa. Masyarakat Ossouna melaporkan bahwa sekitar 280 orang dari desa mereka meninggal di Baguia.¹⁷⁸

* Kamp transit yang lain yang dilaporkan kepada Komisi meliputi kamp di Com (Lautém), Laga (Baucau), Beaco (Viqueque), Zumalai (Ainaro), Laclubar (Manatuto).

179. Orang-orang yang pernah memegang posisi pemimpin di hutan dijadikan sasaran hukuman termasuk eksekusi. Sekitar 475 orang dari subdistrik Baguia ditahan dan disiksa selama interogasi. Mereka yang dibebaskan kemudian harus melapor kepada pihak berwenang dua kali sehari, dan melakukan ronda malam dan kerja paksa, termasuk sebagai anggota TBO. Semua eksekusi yang diingat oleh komunitas-komunitas dalam diskusinya dengan Komisi dilakukan oleh anggota Kopassandha (Pasukan Khusus) dan Batalion 745.¹⁷⁹

180. Orang-orang yang berasal dari Subdistrik Iliomar menceritakan kepada Komisi mereka turun dari sisi tenggara gunung dan pada 28 November mereka bertemu tentara Indonesia. Pasukan ini membawa mereka ke basis militer di Baguia, tempat mereka diinterogasi. Setelah satu minggu orang-orang dari kelompok Iliomar yang tidak diidentifikasi sebagai pemimpin Fretilin disuruh kembali ke Iliomar. Pemimpin Fretilin ditahan di Baguia tempat mereka disiksa dan sebagian dieksekusi.¹⁸⁰

Osso-leru (Quelicai, Baucau)

181. Sampai ABRI menguasainya pada November 1978, kamp penampungan sementara di Osso-leru pernah menjadi basis resistansi di Gunung Matebian. Indonesia memisahkan pejuang Falintil dari penduduk sipil dan banyak di antara pejuang Falintil ini kemudian hilang (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Mereka memberikan makanan kepada orang-orang di kamp transit tapi tidak cukup. Indonesia belum membuat persiapan untuk menampung orang dalam jumlah sebesar itu dan orang-orang terus meninggal karena kelaparan. Orang-orang tinggal di tempat ini hanya sebentar saja karena militer segera membawa mereka ke pusat penahanan yang lebih besar seperti Kota Quelicai (Baucau).¹⁸¹

Uatolari (Uatolari, Viqueque)

182. Uatolari (Viqueque) digunakan sebagai kamp penampungan sementara selama beberapa saat. Orang-orang yang menyerah di Uatolari juga mengalami kelaparan. Setiap hari orang mati di sana. Dua minggu setelah sebagian besar orang datang ke Uatolari dari Gunung Matebian pada November 1978, militer Indonesia dan hansip memindahkan mereka dengan berjalan kaki atau dengan truk ke kamp permukiman di Viqueque.¹⁸²

Lacluta (Viqueque)

183. Orang-orang dari Barique (Manatuto), Fatuberliu (Manufahi), Laleia (Manatuto), Ossu (Viqueque), Venilale (Baucau), Vemase (Baucau), Manatuto Dili, Maubisse (Ainaro), Viqueque, dan Natarbora (Manatuto) menyerah di Lacluta, di mana mereka menderita kekurangan makanan, air bersih, dan perawatan medis. Dalam kesaksiannya, Antonio Vicente Marques Soares menyebutkan bahwa lebih daripada sepuluh orang meninggal setiap hari di sana, terutama anak-anak dan

orang tua. Di sekeliling kamp ada banyak batalion Indonesia termasuk 401 Ular Ambon, 745, 202 Tasikmalaya, 726 Sulawesi, 642 Kalimantan, 411, 122, 408, 320, 527, 405, 407, 408, Linud 100, 744. Pembatasan terhadap warga sipil di dalam kamp membuat mereka sulit bercocok tanam, mengambil air bersih, atau melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk bertahan hidup.¹⁸³

Parlemento (Moro, Lautém)

184. Orang-orang Com dan Asailano menyerah kepada Batalion 512 pada 1977. Segera setelah menyerah mereka dikumpulkan di pantai selama satu minggu. Mereka kemudian pindah ke Parlemento untuk bergabung dengan warga sipil lainnya yang sudah menyerah dari seluruh Distrik Lautém. Hidup sangat susah di kamp penampungan sementara, di mana mereka dibatasi untuk bepergian lebih daripada 100 meter dari kamp. Ini berarti bahwa 2.000 orang yang tinggal di kamp Parlemento sangat menderita kelaparan, karena makanan tidak disediakan oleh para penawan Indonesia mereka. Seorang saksi menyatakan kepada Komisi bahwa dua sampai lima orang meninggal setiap hari di kamp. Ketika sebuah kapal angkatan laut Indonesia berlabuh di pelabuhan Lautém, beberapa laki-laki dapat bekerja sebagai buruh dan menerima dua rantang beras setiap hari mereka bekerja.¹⁸⁴

Kota Railaco (Ermera)

185. Kamp transit di Kota Railaco (Ermera) pada akhir 1979 adalah salah satu yang terburuk. Kamp ini menampung orang-orang yang telah lama mendukung resistansi di gunung-gunung, lebih lama daripada yang lainnya. Eufrazia de Jesus menuturkan kepada Komisi bahwa ia ditangkap pada 13 Oktober 1979 dan ditahan di kamp transit Railaco oleh Batalion 721 selama beberapa bulan. Tidak pernah ada lembaga bantuan asing yang mengunjungi Railaco, dan tahanan dapat bertahan hidup hanya dengan mengumpulkan umbi-umbian dan dedaunan dari sekitar kamp. Hanya satu kali, yakni setelah lebih daripada dua minggu setelah penangkapan mereka, militer pernah memberi mereka sedikit jagung dan ikan asin. Untuk mereka yang sudah mengalami busung lapar, ikan menyebabkan diare dan sering mengakibatkan kematian. Setiap hari hingga sepuluh anak dan orang tua meninggal.¹⁸⁵

Fatubessi (Hatolia, Ermera)

186. Fatubessi adalah basis resistansi sejak 1976 sampai pasukan Indonesia merebutnya pada 1978. Gabriel Ximenes menuturkan kepada Komisi bahwa ia menyerah kepada Batalion 611. Mereka menempatkannya di kamp transit di Fatubessi. Orang-orang sangat lapar. Militer memberi mereka sedikit makanan, namun tidak cukup dan tidak semua orang menerima jatahnya. Gabriel Ximenes mengatakan bahwa kondisinya menjadi semakin buruk di kamp penampungan Fatubessi dibandingkan dengan keadaan sebelum mereka menyerah. Setelah satu bulan militer memindahkan dia dan kelompoknya ke kamp pengungsian di

Kota Ermera. Di sana mereka disekap dengan pengawasan ketat yang membuat mereka sulit berkebul. Kematian akibat kelaparan terus terjadi.¹⁸⁶

Uma Metan dan Lebos (Alas, Manufahi)

187. Uma Metan dan Lebos merupakan dua kamp penampungan penting di dekat Kota Alas di Manufahi. Keduanya dijadikan basis untuk melakukan operasi menumpas resistansi di gunung-gunung di sekitar Manufahi. Banyak satuan ABRI yang berbasis di sana, termasuk pasukan dari Batalion Linud 700, Batalion 745 dan 310, dan Kopassandha (Pasukan Khusus). Tempat ini juga merupakan markas Koramil dan Hansip setempat. Pada Agustus 1978 Uma Metan mulai menampung orang-orang yang menyerah atau yang tertangkap. Orang-orang yang menyerah di Alas, Same, Fatuberliu, Turisca (semua di Manufahi), Maubisse, (Ainaro), Aileu, Soibada (Manututo), dan Natarbora (Manatuto) dibawa ke sana, dan pada puncaknya ada 80.000 orang lebih yang tinggal di sana. Banyak orang yang ditahan di Uma Metan terus disekap di sana dan bukannya diberikan tempat tinggal baru di tempat lain. Tentara memerintahkan para tahanan membangun balai desa dan sekolah. Bangunan sekolah seolah-olah dibangun agar tentara dapat mengajarkan bahasa Indonesia kepada penghuni kamp. Padahal hanya perempuan muda yang dapat datang ke “sekolah”, yang dikenal sebagai pusat pemerkosaan oleh ABRI.¹⁸⁷ Militer tidak mengizinkan tahanan keluar untuk berkebul atau mencari makanan, dan meskipun gereja telah mengatur pemberian bantuan makanan kepada para tahanan, itu tidak cukup. Banyak orang meninggal karena kelaparan dan penyakit seperti diare dan beri-beri. Yang lain dieksekusi karena keterlibatan mereka di dalam Resistansi (lihat 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Menurut pemimpin setempat, sebanyak 2.000 orang dikubur di dalam kuburan massal di lokasi kamp Uma Metan.¹⁸⁸

Fahinehan (Fatuberliu, Manufahi)

188. Pada 1978 orang-orang Fahinehan, Bubususu, dan Caicasa (semua di Subdistrik Manufahi, Manufahi) menyerah kepada TNI, setelah *base de apoio* untuk Sektor Centro Sul mereka dihancurkan. Mereka mula-mula dibawa ke daerah pinggir pantai Kolokau, Besusu, dan Dolok. Mereka kemudian dikumpulkan di Desa Fahinehan, di bawah kontrol tentara Indonesia dari Batalion Linud 100. Menurut Eleajáro Teófilo, lebih banyak orang yang meninggal setelah mereka menyerah karena kekurangan makanan dan obat-obatan, dibandingkan dengan yang meninggal di hutan.

Dalam beberapa hari pernah hingga sepuluh orang meninggal dalam satu hari. Tidak ada bantuan kemanusiaan. ABRI memperkenalkan kami mencari makanan hanya jika kami dikawal oleh tentara atau Hansip. Kami tidak diperbolehkan bergerak lebih dari 1 kilometer [dari Fahinehan], atau pergi ke suatu tempat dan mereka tidak dapat melihat kami. Dua orang dibunuh karena pergi lebih dari satu kilometer.¹⁸⁹

189. Antara 1981 dan 1983 orang-orang dari ketiga desa ini dipindahkan dua kali. Setiap perpindahan selalu membuat masalah keamanan dan makanan (lihat paragraf 288-289, di bawah).

Turiscail (Turiscail, Manufahi)

190. Kota Turiscail juga digunakan sebagai kamp transit bagi orang-orang yang tinggal di *base de apoio* Centro Sul. Mereka yang ditahan terdiri atas orang-orang dari 11 desa sekitar seperti Foholau, juga dari Caicasa dan Bubususu (keduanya di Fatuberliu), dan dari tempat-tempat yang jauh seperti Maubisse (Ainaro) dan Dili. Menurut pengakuan saksi, militer Indonesia membagikan makanan hanya satu kali; setiap keluarga menerima tiga rantang beras jika mereka tiba di kamp. Tomás Barbosa mengingat:

*Tentara menyuruh kami mencari senjata di hutan. Mereka mengatakan orang-orang yang datang membawa senjata akan mendapatkan tambahan satu rantang jagung, dan mereka yang gagal membawa kembali senjata tidak akan mendapatkan jatah makanan.*¹⁹⁰

191. Saksi menuturkan kepada Komisi bahwa banyak orang meninggal pada waktu itu. Orang-orang disuruh membangun sendiri rumah darurat mereka, dan akhirnya mereka mampu mengolah makanan sendiri. Situasi membaik ketika ICRC mulai memberikan bantuan kemanusiaan. Empat atau lima tahun setelah mereka menyerah, orang diizinkan kembali ke desanya sendiri.¹⁹¹

Metinaro (Metinaro, Dili)

192. Operasi militer gabungan berskala besar terjadi di daerah Metinaro (Hatu Konan, Laçlo) pada pertengahan 1978. Militer membawa orang-orang yang tertangkap ke kamp transit Metinaro. Misalnya, Batalion 315 menangkap Manuel Carceres da Costa di Subdistrik Laçlo (Manatuto) pada Juli 1978. Mereka menahannya bersama tahanan lainnya di pos komando batalion di Ilimano (Umakaduak, Laçlo, Manatuto) untuk diinterogasi selama satu hari. Setelah itu, militer mengirim mereka ke Metinaro (Dili). Tempat mereka tinggal dikelilingi oleh pos-pos militer. Tidak seorangpun bisa keluar. Setiap orang didaftar dan mereka harus tinggal di sana. Kematian karena kelaparan mengancam orang-orang yang tinggal di sana. Metinaro kemudian menjadi kamp permukiman. Orang-orang tinggal di sana selama satu tahun.¹⁹²

193. Proses investigasi bagi pemimpin atau bagi orang-orang yang dianggap memiliki informasi yang berguna bagi pihak Indonesia berbeda. Jacinto Alves, yang pernah secara bersamaan menjadi *colaborador* bagi Staf Umum Falintil dan sekretaris pribadi bagi Nicolau Lobato ketika Lobato menjabat komisaris politik dan Kepala Staf Umum, ditangkap bersamaan dengan Manuel Carceres da Costa. Ia diinterogasi langsung setelah ditangkap. Mereka menanyakan posisi apa yang dipegang ketika bergerilya di hutan, di mana letak kekuatan Falintil, dan di mana

pemimpin mereka. Ia mengatakan bahwa ia pernah bekerja di seksi logistik Falintil, namun kemudian mereka mengatakan bahwa mereka menemukan tasnya dengan buku harian, pistol, dan buku yang bertuliskan “Kapitalisme Kontemporer” di dalamnya. Karena buku tersebut, mereka mengecapnya sebagai seorang komunis dan karena ada pistol mereka mengatakan bahwa ia pasti pemimpin. Di Metinaro ia dibawa menghadap komandan Batalion 144, seorang baret merah (Kopassus), yang juga komandan Kotis dan perwira lainnya. Ia kemudian diserahkan ke kepala intelijen militer, Mayor Ganap, untuk interogasi lebih lanjut. Setelah tiga bulan di Metinaro ia diizinkan pulang ke Dili, namun begitu tiba di sana ia diminta melapor setiap hari di Sang Tai Hoo untuk interogasi lebih lanjut.¹⁹³

Bagaimana sebagian penduduk bisa hidup di dalam kamp

Dalam sebuah diskusi dengan Komisi, anggota masyarakat Ahic (Viqueque) mengenang kembali pengalaman mereka menyerahkan diri dan perjuangan mereka untuk hidup.

Pada 1979 kami menyerah di kota lama Lacluta. Di sana sekitar 500 orang mati karena kelaparan dan kekurangan obat-obatan untuk TBC, busung lapar[marasmus], dan diare. Banyak dari yang meninggal sudah tidak mempunyai keluarga lagi untuk menguburkan mereka. Sebagian meninggal di dalam kamp dan sebagian meninggal ketika mereka keluar ke hutan mencari makanan. Kami tetap hidup dengan memakan makanan seperti:

- Sagu yang terbuat dari pohon palem
- Buah-buahan dari pohon karet
- *Goiaba* (guava – jambu batu)
- Pucuk daun kelapa
- *Maek* (umbi)
- *Kuan* (ubi jalar – *Dioscorea hispida*)
- *Aidak* (sejenis buah leci – *Schlerichera oleosa*)
- Kangkung
- Tunas pisang
- *Laho* (tikus)
- *Samea* (ular)
- *Manduku* (katak)

Kuda dijual hanya dengan harga Rp1.000,00 ditambah dua rantang nasi dari Hansip. Kalung emas dapat diperdagangkan dengan satu rantang nasi.

Sebagai penukar makanan, anak-anak perempuan dapat dipaksa menikah dengan Hansip dan ABRI meskipun mereka telah menikah secara sah.

ABRI dan camat memutuskan memindahkan setiap orang dari Kota Lama Lacluta ke Desa Dilor. Di Desa Dilor pemimpin politik dan anggota Falintil disiksa dan dibunuh. Semua laki-laki yang berusia di atas 15 tahun diwajibkan melapor ke pos-pos militer pada pagi dan malam hari, dan melakukan tugas ronda di malam hari. Jika mereka tidak patuh, semua harta benda mereka dicuri, dan mereka bisa disiksa (direndam di air kotor selama tiga jam, diminta berjalan di semak-semak berduri, berdiri di atas batubara, atau digantung dengan kepala ke bawah). Perempuan sering diperkosa dan dipaksa “kawin” dengan anggota Hansip dan ABRI tanpa ada komitmen dari keluarga korban; banyak anak yang lahir dari kawin paksa ini ditinggalkan begitu saja.

Pada 1979-1980 kami menerima bantuan dari Palang Merah Indonesia (ikan asin, ayam, ikan, susu, tepung, garam, selimut, dan obat-obatan) dan diobati oleh staf kesehatan—seorang dokter dan dua perawat. Tetapi makanan yang kami terima mengandung protein terlalu banyak untuk dicerna oleh mereka yang kekurangan gizi, sehingga banyak di antara mereka meninggal. Kami diperkenankan ke kebun-kebun, namun hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dari Dilor, dan hanya dengan meminta izin perjalanan kepada pihak keamanan. Sering terjadi kerja paksa tanpa dibayar. Tidak ada pendidikan karena tidak ada fasilitas dan guru. Anak-anak usia sekolah direkrut secara paksa menjadi anggota TBO (tenaga bantuan operasi).¹⁹⁴

Kamp-kamp permukiman

194. Dengan selesainya pendaftaran dan penyaringan, warga sipil yang menjadi tahanan militer Indonesia dimukimkan di pusat permukiman penduduk yang terkontrol, yang dikenal dengan sebutan ‘tempat permukiman’. Dalam beberapa kasus, permukiman ini terletak di tempat yang sama dengan lokasi transit. Atau bisa juga terletak di desa asal tahanan, atau desa yang sudah ada yang bukan merupakan desa asal tahanan, atau bisa juga desa yang baru dibentuk. Pertimbangan keamanan lebih diutamakan daripada pertimbangan kesejahteraan untuk menentukan pilihan kamp-kamp permukiman tertentu. Kamp-kamp permukiman menjadi rumah bagi ratusan ribu warga Timor-Leste. Banyak dari kamp-kamp ini juga menjadi lokasi bencana kelaparan pada 1978 dan 1979.

195. Ciri khas utama kamp-kamp permukiman ini sudah diketahui oleh dunia sejak 1980-an.¹⁹⁵ Kamp-kamp tersebut menjadi elemen utama strategi militer Indonesia untuk mengendalikannya penduduk dan mengisolasi mereka dari resistansi Timor-Leste. Para tahanan dikontrol secara ketat dan dibatasi perjalanan mereka keluar dari kamp permukiman. Hal ini mempersulit akses terhadap lahan pertanian yang memadai untuk menghasilkan makanan sehingga kelaparan semakin

meluas. Kamp-kamp ini menjadi tempat yang penuh rasa curiga, takut, dan tidak aman yang sengaja dirancang untuk mengendalikan dan mematkan sentimen nasionalis rakyat Timor-Leste. Meskipun secara resmi Indonesia mengatakan yang sebaliknya, tempat-tempat itu tidak pernah dirancang untuk membantu perkembangan material penduduk.

Lokasi kamp permukiman

196. Komisi telah berupaya mengidentifikasi semua kamp permukiman yang didirikan pada akhir 1970-an. Tabel 6 (Kamp-kamp permukiman pada akhir 1979) menunjukkan daftar 139 kamp permukiman yang diketahui. Daftar tersebut sebagian besar diambil dari peta kasar yang menunjukkan lokasi-lokasi tempat CRS (Catholic Relief Services, LSM Amerika Serikat) dan Palang Merah Internasional (ICRC) mendistribusikan bantuannya pada saat itu.¹⁹⁶ Komisi yakin bahwa jumlah kamp yang sebenarnya adalah lebih besar daripada 139 lokasi yang ditunjukkan pada peta karena diketahui dari sumber-sumber lain bahwa sebagian tempat yang pada peta ditunjukkan dengan hanya satu titik mempunyai beberapa kamp. Ainaro, misalnya, mempunyai tiga kamp.

197. Semua distrik kecuali Oecussi mempunyai kamp permukiman. Pada ke-12 distrik tempat kamp berada, hampir setiap subdistrik mempunyai setidaknya satu kamp. Beberapa subdistrik mempunyai lima dan sebagian besar mempunyai tiga atau empat kamp. Banyak kamp yang bersifat sementara. Sebagian, seperti Dataran Faebere (Iliomar, Lautém), kemudian ditutup dan daerah ini ditinggalkan tak berpenghuni. Banyak kamp terletak di permukiman baru yang belum ada pada zaman Portugis.

Tabel 6: Kamp permukiman pada akhir 1979

| Distrik | Subdistrik | Tempat |
|---------|--------------|---|
| Aileu | Aileu | Kota Aileu |
| | | Bandeira Hun (Sucu Liurai) dan Fatubosa |
| | Laulara | Tohumeta |
| | Liquidoe | Kota Liquidoe |
| | Remexio | Remexio |
| Ainaro | Ainaro | Kota Ainaro, Soro dan Builico |
| | | Manutassi dan Fatuk Maria |
| | | Mau-Nuno |
| | | Mau-Ulo |
| | | Suro-Craic |
| | Hato Builico | Hato Builico |
| | | Numumogue dan Dare |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| | Hato Udo | Kota Hato Udo |
| | | Raimea |
| | Maubisse | Aituto |
| | | Lientuto (Aituto) |
| | | Kota Maubisse |
| Venilale | Baguia | Kota Baguia |
| | | Ledena (Lavateri) |
| | Baucau | Baucau Lama |
| | | Caicido (Caibada Uaimua) |
| | | Ceisal |
| | | Sekolah Teknik Fatumaca (Gariuai) |
| | | Waili dan Buibau |
| | Laga | Atelari |
| | | Laga |
| | | Saelari |
| | Quelical | Gurusa |
| | | Kota Quelical |
| | Vemasse | Ostico dan Loilubo |
| | | Vemasse |
| | Venilale | Bercoli (Uma Ana Ulo) |
| Venilale Barat | | |
| Maliana | Atabae | Aidabaleten |
| | | Atabae |
| | | Biacou (Aidabaleten) |
| | Balibó | Kota Balibó |
| | Bobonaro | Kota Bobonaro |
| | | Leber |
| | | Tasgolo (Lour) |
| | Cailaco | Cailaco |
| | | Marco |
| | Lolotoe | Lebos |
| | | Lolotoe |
| | Maliana | Tapo/ Memo |
| Covalima | Fatumean | Fatumean |
| | Fohorem | Kota Fohorem |

| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| | Mape/ Zumalai | Beco |
| | | Kamenaca |
| | | Mape |
| | Suai | Meop (Labarai) |
| | | Orun (Debos) |
| | | Kota Suai |
| | Tilomar | Casabauc dan Maudemo |
| | | Kui Tao(Maudemo) dan Kawa Uman (Casabauc) |
| | | Kota Tilomar |
| Dili | Dili | Dare dan lain-lain |
| | | Kota Dili |
| | | Kota Dili |
| | Hera | Hera |
| | Metinaro | Manleu |
| Metinaro (Sabuli) | | |
| Ermera | Kota Ermera | Kota Ermera |
| | | Borhei (Humboe) |
| | | Hotkolat? Falimanu? |
| | | Mangero (Riheu) |
| | Hatolia | Betu Bu (Ailelo) |
| | | Hatolia Kota |
| | | Fatu bessi |
| | | Poelete |
| | | Urahu |
| | Letefoho | Goulolo |
| | | Kota Letefoho |
| Railaco | Railaco dan lain-lain | |
| Lautém | Iliomar | Dataran Faebere |
| | | Kota Iliomar |
| | Lautém Moro | Buihomau (Serelau) |
| | | Com |
| | | Daudere |
| | | Laivai (Ililai) |
| | | Laleno (Maina 2) |
| | | Lautém dan Moro |

| | | | |
|------------|--------------------|--|---------------------------------|
| | Lospalos | Lore | |
| | | Lospalos | |
| | | Rasa/Bauro dan Fuiluro | |
| | Luro | Luro | |
| | Tutuala | Mehara | |
| | | Poros (Mehara) | |
| Tutuala | | | |
| Liquiça | Bazartete | Kota Bazartete | |
| | | Leorema | |
| | | Raukasa (Lauhata) | |
| | | Tibar | |
| | Liquiça | Caikasiko (Asumano) | |
| | | Dato (Liquiça) | |
| | | Hatarlema (Hatuqisi) | |
| | Maubara | Irlelo (Cuico) | |
| | | Lebumeta (Vaviquenia) | |
| | | Kota Maubara | |
| | Barique/ Natarbora | Kota Barique | |
| | | Selatan Barique (tidak ada di peta biasa) | |
| | | Lebih jauh selatan Barique (tidak ada di peta biasa) | |
| | | Tuqueti (Cribas) | |
| | | Umaboku | |
| | Laclo | Behau (Umakaduak) | |
| | | Laclo | |
| | Laclubar | Kota Laclubar | |
| | | Lafulau (Manelima) | |
| | | Lei (Orlalan) | |
| | Laleia | Laleia-Kampung Baru (Lifau) | |
| | Manatuto | Carlilo (Aiteas) | |
| | | Kota Manatuto | |
| | Soibada | Man Fahe (Teras) | |
| | | Kota Soibada | |
| | Manufahi | Alas | Kota Alas, Uma Metan, dan Lebos |
| | | | Besusu (Uma Berloik) |
| Fatuberliu | | Fatuberliu/Fahinehan | |
| | | Welaluhu (Klakuk) | |

| | | |
|----------|-------------|---------------------------------|
| | Same | Betano |
| | | Daisua |
| | | Holarua |
| | | Letefoho |
| | | Kota Same |
| | | Babulu |
| | Turiscai | Turiscai |
| Viqueque | Lacluta | Aimeta Hun (Dilor) |
| | | Dilor |
| | | Lacluta Lama |
| | | Uma Tolu |
| | Ossu | Buanurak (Loi Huno) |
| | | Builale dan Kaiwatu |
| | | Loi Huno |
| | | Ossu |
| | Viqueque | Buicarin (Luca) |
| | | Viqueque (Beloi dan lain-lain) |
| | Uato Carbau | Irabin Leterae (Irabin de Cima) |
| | | Kota Uato Carbau |
| | Uatolari | Afaloicai (Babulo) |
| | | Wesoro |
| | | Uatolari Kota |

Sumber: Ditafsirkan dari peta yang disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat Edward Masters pada Audiensi di hadapan subkomite mengenai Masalah Asia dan Pasifik – Komite Urusan Luar Negeri, DPR, Kongres ke-96, Sesi pertama, 4 Desember 1979, halaman 28.

Kondisi di kamp-kamp permukiman

198. Kesaksian yang diterima oleh Komisi mendukung kesimpulan berikut mengenai kondisi di dalam kamp-kamp permukiman:

- Dalam banyak kasus, kamp permukiman di suatu kota atau desa berada di lokasi tertentu di dalam wilayah atau terpisah dari kota. Di Hatolia (Ermera), misalnya, orang-orang yang baru menyerahkan diri dan orang-orang dari tempat lain dimukimkan di sebuah area terpisah bernama Modolaran.
- Dalam kasus lain, tidak ada perbedaan antara orang yang sudah tinggal di desa sebelum desa tersebut dijadikan kamp permukiman dan orang-orang yang datang dari luar daerah tersebut. Di Iliomar (Lautém), misalnya, warga dan tahanan ditempatkan di area sempit yang dilingkari oleh pos-pos militer.

- Warga biasa dan tahanan diwajibkan memiliki surat jalan jika mereka ingin bekerja di kebun di luar area kamp permukiman. Dengan demikian semua orang Timor-Leste terkena ketentuan keamanan yang berlaku untuk permukiman.
- Tidak ada kawat berduri; penghalang yang ada hanyalah lingkaran pos-pos militer dan sistem perizinan yang membatasi akses untuk mendapatkan makanan dari luar dan pergi ke kebun, dan hal ini menjadikan orang tetap lapar.
- Ada sejumlah perbedaan dalam hal kondisi tahanan dan orang-orang yang sejak awal menyerahkan diri atau tidak pernah mengungsi ke gunung. Orang-orang yang menyerah sejak awal atau tidak pernah mengungsi mendapat akses lebih banyak kepada tanah dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan pihak penguasa, yang menjadikan hidup mereka lebih mudah.
- Hanya di Kota Dili dan Baucau penduduknya menjalani hidup yang hampir normal. Bahkan di sini pun ada pengecualian—misalnya kamp yang dijaga ketat di Mercado Municipal Dili, Manlewana (dekat bandar udara sekarang), dan Betu Barat di Comoro.
- Sebagian besar kamp pengungsian dipertahankan hingga sekitar 1980 atau 1981, dan banyak yang masih ada hingga 1980-an. Selain itu, setelah kamp-kamp dibongkar, para pemukim tidak selalu diperbolehkan kembali ke daerah asal mereka, dan harus menetap di desa-desa yang baru dibangun yang dianggap aman atau memiliki nilai strategis bagi militer Indonesia. Jika mereka kembali ke desa asal, mereka akan hidup di bawah berbagai aturan yang berdampak mobilitas mereka dan di mana mereka dapat membangun rumah.

Kehidupan di kamp permukiman Iliomar

Fernando Amaral adalah mantan kepala desa di Fatt Iliomar (Iliomar, Lautém). Dia diwawancarai oleh Komisi dan menggambarkan keadaan ketika tinggal di bawah kontrol militer Indonesia di dalam kamp di Kota Iliomar setelah masyarakat menyerah dari gunung Matebian pada November 1978. Yang berikut adalah ringkasan dan kutipan-kutipan dari wawancaranya.

Orang-orang dari Iliomar turun dari Gunung Matebian pada November 1978. Setelah militer menginterogasi mereka di kamp penampungan di Baguia, mereka memerintahkan orang-orang kembali ke Subdistrik Iliomar. Di sana, militer mendirikan kamp permukiman. Dalam perjalanan, tak seorangpun mengawal penduduk dan beberapa orang melarikan diri kembali ke pergunungan saat itu. Ketika orang-orang yang tersisa sampai di Subdistrik Iliomar, tempat tersebut benar-benar kosong. Orang-orang memutuskan tinggal di dekat kantor kecamatan yang dibangun oleh Portugis (*posto*). Sekitar 4.000-6.000 orang tinggal di sekitar gedung kantor

dan mendirikan tempat bernaung sementara. Beberapa orang datang dari tempat-tempat lainnya, seperti Lospalou, Tutuala, dan Uato Carbau. Mereka tidak lari karena khawatir akan ditangkap oleh pasukan Indonesia. Namun demikian, mereka dapat bebas mencari makanan. Mereka mengambil makanan dari rumah mereka yang dulu dan membawanya balik.

Tiga minggu kemudian pasukan ABRI dari Batalion 328 dan Hansip tiba di Iliomar. Mereka langsung mendirikan enam pos militer di sekitar permukiman penduduk yang mengitari *posto*. Dua hari berikutnya, mereka memerintahkan orang untuk mendaftarkan diri. Mereka memanggil para kepala desa dari enam desa di subdistrik tersebut dan memerintahkan mereka untuk mengorganisasi rakyatnya. Kemudian mereka memerintahkan orang-orang untuk membangun kembali tempat tinggal mereka di dalam lingkaran pos tersebut. Mereka juga mengatakan tak seorangpun dapat pergi lebih daripada 1 km dari *posto*, dan mengatakan siapapun yang melanggar aturan tersebut akan ditembak.

Fernando Amaral, kepala desa Fuat (Iliomar, Lautém), menuturkan kepada Komisi:

Kami tidak diizinkan mengunjungi tetangga kami, atau bahkan keluar untuk bekerja dan menggarap sawah kami... Kami berusaha mencari makanan untuk kebutuhan kami sendiri dan wajib lapor setiap hari ke tentara atau Hansip. Dan kami tak diizinkan berbahasa Portugis.¹⁹⁷

Warga turun dari Gunung Matebian dalam keadaan sangat lemah dan kelaparan. Prajurit ABRI memberi mereka jagung, sekitar tiga rantang seminggu per keluarga. Meskipun jumlah tersebut hampir tak mencukupi, prajurit ABRI tidak mengizinkan mereka bercocok tanam untuk memperoleh makanan. Peraturan ini segera saja menyebabkan warga di Posto Iliomar kelaparan. Mulanya, masih ada kelapa untuk dimakan, tetapi ratusan orang memetikinya sehingga dengan cepat pula kelapa-kelapa itu habis sehingga akhirnya mereka terpaksa memakan umbi-umbian dan daun-daunan yang tumbuh liar. Setelah itu mereka menguliti batang pisang untuk diambil bagian tengahnya, lalu merebus dan memakannya. Jadi, mereka bertahan hidup dengan apa yang biasanya dianggap sebagai makanan babi. Mereka menderita penyakit seperti kolera dan beri-beri. Kematian demi kematian pun terjadi setiap hari.

Warga memohon kepada tentara agar diizinkan keluar kamp permukiman. Mereka meminta para prajurit mengutus Hansip untuk mengawal mereka, sehingga mereka dapat pergi ke rumah-rumah mereka yang lama dan mengumpulkan makanan yang ada di sana, seperti umbi-umbian, kelapa, nangka, singkong, dan daun-daunan

yang bisa dimakan. ABRI akhirnya mengizinkan mereka pergi. Tapi sebelum pergi, tentara menulis nama mereka pada selebar tripleks yang harus mereka kalungkan di leher. Ketika kembali, mereka melapor dengan cara mengembalikan tripleks itu. Namun tak lama kemudian, 162 orang melarikan diri dari kamp Iliomar ke hutan-hutan, berharap dapat mengurangi rasa lapar mereka. Sejak itu, tentara tidak lagi mengizinkan orang keluar dari Iliomar, dan kelaparan pun kembali memburuk.

Fernando Amaral, mantan kepala desa Fuat, mengatakan dari desanya saja ada 96 orang yang mati. Mereka dikubur di pertigaan jalan ke Iliomar. Gaspar Seixas, yang ketika itu menjabat sebagai wakil camat Iliomar antara 1979 dan 1985 memperkirakan bahwa sekitar 200-300 orang mati di Iliomar antara 1978-1980. Sebagian besar dikuburkan di sekolah Portugis yang lama. Sejak saat itu, keluarga orang-orang yang mati itu telah menggali sisa jenazah kerabat mereka dan menguburkannya kembali.¹⁹⁸

Mau Chiga (Hato Builico, Ainaro)

199. Gunung Kablaki, yang membentang antara Distrik Ainaro dan Manufahi, merupakan basis besar Resistansi. Pada 1976, warga dari kota dan desa sekitarnya, termasuk Same, Maubisse, Ainaro, dan bahkan dari Subdistrik Ermera dan Atsabe di Distrik Ermera lari ke sana untuk mencari keselamatan. Pada September 1977, tentara Indonesia termasuk Batalion 121, 521, dan Linud 100, menyerang basis resistansi yang terletak di gunung itu, dan menangkap sejumlah besar orang yang sedang mengungsi di sana. Orang-orang itu ada yang berasal dari Desa Mau Chiga (Hato Builico, Ainaro). Masyarakat Mau Chiga mengatakan kepada Komisi mengenai pengalaman menyerahkan diri kepada militer Indonesia. Tentara segera mengembalikan orang-orang Mau Chiga ke tempat asalnya. Mereka mendapati rumah mereka telah dihancurkan, ternak peliharaan mereka dibunuh, dan ornamen-ornamen emas di rumah mereka telah dicuri oleh tentara. Sekitar dua tahun kemudian, pada pertengahan 1979, semua orang dari sedikit yang tersisa di Gunung Kablaki menyerahkan diri. Sekali lagi, mereka yang berasal dari Mau Chiga dipulangkan ke sana. Mereka tinggal di Dare, di jalan Ainaro. Mereka dapat berkebut di luar perkampungan, tetapi hanya atas seizin tentara. Setiap kali ingin keluar, mereka harus memita izin terlebih dahulu. Jika tentara menemukan ada yang keluar tanpa izin, mereka akan dihukum dengan cara direndam atau dipukuli semalaman. Dengan adanya semua larangan itu, mustahil bagi mereka untuk dapat hidup normal. Orang-orang itu menderita kelaparan berat sampai bantuan pangan dari ICRC akhirnya tiba pada 1980.¹⁹⁹

Hatolia, Ermera

200. Kota Hatolia (Hatolia, Ermera) adalah kamp permukiman lainnya. Idelfonso dos Reis menuturkan kepada Komisi bahwa ia menyerah pada Batalion 507 ABRI pada 20 Juli 1978 di suatu tempat di Subdistrik Hatolia. Tentara membawanya dengan kelompok Hatolia, lalu menyuruh mereka tinggal di Kampung Modolaran. Tentara memberi mereka sedikit jagung, ikan asin, dan garam. Ikan asin itu membuat orang diare, dan akibatnya banyak warga yang meninggal. Orang tua dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terkena diare dan merekalah yang paling banyak meninggal. Selama hampir setahun keadaan di kamp Modolaran teramat buruk bagi 7.000 warga yang tinggal di sana.

201. Modolaran dikelilingi oleh delapan pos militer. Tak seorangpun diperbolehkan keluar kamp lebih daripada 100 meter. Warga memohon pada tentara untuk ikut pergi mencari makanan bersama mereka. Kadang-kadang tentara mengizinkan dan merekapun pergi ke desa tetangga, yaitu Desa Leimea Kraik dan Samara untuk mencari umbi-umbian yang bisa dimakan. Kelaparan di Kamp Hatolia berlangsung hingga akhir 1979. Para pengungsi yang berasal dari luar Hatolia, seperti dari Zumalai (Covalima), tampaknya menanggung lebih banyak kematian dibanding yang lain. Ketika ICRC datang dengan bantuan pangan pada akhir 1979, para keluarga menerima cukup makanan dan perawatan kesehatan untuk mengembalikan kondisi kesehatan mereka. Tak lama kemudian, pada 1980, tentara memberikan lebih banyak kebebasan kepada warga untuk bergerak. Mula-mula mereka memindahkan warga ke Leimea Kraik. Kemudian mereka mengizinkan warga pergi dari sana dan kembali ke rumah mereka. Banyak yang pergi ke Ermera atau Dili.²⁰⁰

Betano, Manufahi

202. Maria José da Costa menuturkan kepada Komisi bahwa pada Agustus 1978 Batalion Linud 700 menangkap dia dan lainnya di daerah Dolok (Alas, Manufahi). Ia dibawa ke Betano (Same, Manufahi). Di sana ia diberi makanan, tetapi tak cukup. Warga diizinkan berkebun, tetapi hanya sampai di seberang Sungai Cara Ulun, yang berjarak empat kilometer di barat Betano. Pada waktu-waktu tertentu, tak seorangpun diizinkan pergi ke kebun. Larangan ini menyebabkan warga mengalami kelaparan dan banyak yang meninggal. Di Betano, warga hidup dalam kondisi seperti itu selama lima tahun (sampai 1983). Setelah itu, tentara mengizinkan warga meninggalkan Betano. Maria José da Costa pergi ke Same bersama suaminya.²⁰¹

Kematian di kamp permukiman

203. Kondisi fisik orang-orang yang tiba di kamp persinggahan sangatlah buruk. Persediaan makanan yang tak memadai, ditambah lagi dengan berbagai larangan untuk mencari atau menanam tanaman pangan, dan jumlah penduduk yang memang sudah padat membengkak dengan datangnya orang-orang dari luar.

Selain itu, warga harus tinggal di ruangan yang sempit. Semua kondisi itu terus berlangsung di kamp permukiman. Seiring dengan berlalunya waktu, khususnya pada 1978 hingga 1979, angka kematian mencapai jumlah yang mengerikan dan hal ini terus berlanjut hingga program bantuan kemanusiaan internasional dimulai pada akhir 1979.

204. Kesaksian yang telah diceritakan oleh para saksi di sini memberi gambaran tentang kematian yang diakibatkan oleh fisik yang lemah, sakit, dan kelaparan, sebagaimana yang dilihat oleh warga yang berhasil selamat dari kamp-kamp tersebut. Pastor Yesuit Indonesia Romo Alex Dirdjasusanto, yang mengunjungi berbagai wilayah Timor-Leste pada awal 1979, memberikan pandangannya sendiri tentang angka kematian pada waktu itu. Pada awal Maret ia mengunjungi Kota Maubisse (Maubisse, Ainaro) dan empat kali diundang dalam upacara penguburan warga yang meninggal, yang berlangsung selama satu hari. Katekis di Maubisse mencatat dalam buku doanya jumlah kematian pada 1979: Januari: 79; Februari: 101; minggu pertama Maret: 26. Di Turisca (Manufahi), satu minggu kemudian, Romo Dirdja diberitahu bagaimana angka kematian meningkat tajam sejak 1977: 1977, enam meninggal; 1978, 164 meninggal; 1 Januari hingga 13 Maret 1979, 120 orang meninggal. Ia juga diberitahu bahwa tingkat kematian di antara “pengungsi” di Ermera sekitar sepuluh orang per hari.²⁰²

205. Kesaksian independen lainnya mengenai kondisi fisik warga di kamp-kamp yang sangat mengenaskan, disampaikan oleh beberapa diplomat dan wartawan asing yang berkunjung ke Timor-Leste pada September 1978. Para pengunjung ini, yang didampingi oleh menteri luar negeri Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja, konon merasa sangat terganggu melihat kondisi di sebuah kamp di Remexio (Aileu), tempat 4.000 orang ditahan. Seorang wartawan diberitahu tentang adanya ribuan kematian di distrik itu dan hal serupa terjadi pula di kamp-kamp yang terletak di tempat-tempat lain, termasuk di Suai (Covalima). Foto-foto orang dewasa dan anak-anak yang kekurangan gizi, yang diambil oleh wartawan lain dan dipublikasikan di surat-surat kabar di seluruh dunia, menjadi bukti yang tak terbantahkan tentang bencana kelaparan yang diderita warga Timor-Leste dan tentang perlunya bantuan dalam waktu yang sangat mendesak.²⁰³

206. Data yang disusun oleh Catholic Relief Services (CRS) memberikan pemahaman lebih jauh tentang angka kematian di beberapa tempat sebelum berbagai program bantuan internasional dimulai di Timor-Leste (lihat Tabel 7 di bawah). Sementara CRS menyangkal “keakuratan ilmiah” data itu, ternyata data itu sesuai dengan materi lainnya yang diterima Komisi.

Tabel 7: Angka kematian rata-rata di beberapa kamp permukiman, sebelum dan setelah datangnya bantuan internasional*

| Distrik | Kamp permukiman | Sebelum bantuan (Jan-Jul 1979) (Kematian rata-rata bulanan) | Sebelum bantuan (Sep 1979-Jan 1980) (Kematian rata-rata bulanan) | Penduduk subdistrik Juni 1980 |
|---------|-----------------|---|--|-------------------------------|
| Lautém | Lospalos | 72 | 12 | |
| | | | | 15.693 |
| | Lore | 8 | Nihil | |
| | Lautém | 171 | 20 | 9.143 |
| | Tutuala | 21 | 2 | 2.623 |
| | Luro | 479 | 25 | 5.205 |
| | Iliomar | 305 | 10 | 5.435 |
| Baucau | Laga | 200 | 30 | 13.989 |
| Ermera | Hatolia | 13 | 1 | 15.096 |
| | Letefoho | 13 | Nihil | 11.501 |
| | Railaco | 4 | Nihil | Nihil |

207. Akurat atau tidak, yang jelas data tersebut menunjukkan bahwa program-program bantuan internasional sangat diperlukan untuk menghentikan angka kematian yang terus meningkat di kamp-kamp permukiman di Timor-Leste.

Tanggapan darurat kemanusiaan (1979-1980)

208. Kenangan hidup yang paling banyak dialami orang Timor-Leste sebelum dan setelah mereka ditangkap atau menyerah adalah tentang kelaparan. Semua pemerintah memiliki tanggung jawab di bawah hukum internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan ketika dibutuhkan, atau untuk mengizinkan pemerintah lain memberikan bantuan kemanusiaan. Setelah pemerintah Indonesia melakukan invasi pada 1975 dan menguasai wilayah Timor-Leste, kedua masalah di atas menjadi tanggungjawabnya. Bahkan untuk penduduk yang tidak berada di bawah kendalinya, seperti di daerah-daerah kekuasaan Fretilin, Pemerintah Indonesia tetap berkewajiban mengizinkan pemerintah negara lain mengulurkan bantuan kepada mereka. Bagian ini menggambarkan apa yang telah diketahui Komisi tentang upaya bantuan kemanusiaan.

* Diambil dari: CRS Indonesia, Bantuan Darurat untuk Timor (Fase I): Laporan Akhir, 18 Maret 1980, hal. 8, Submisi CRS, Lampiran 10. Catatan: hanya kolom 2-4 muncul di laporan CRS. Total penduduk yang hidup pada 1980, yang ditunjukkan di kolom 5, hanya untuk perbandingan saja. Sebagian besar subdistrik memiliki tiga atau empat kamp. Angka-angka populasi pada 1980 di Lore dan Lospalos, yang keduanya berada di Subdistrik Lospalos, telah dipadukan.

209. Di Timor-Leste, kebijakan pemerintah Indonesia tentang bantuan kemanusiaan sepenuhnya ditentukan oleh militer. Sampai September 1979, lembaga-lembaga bantuan internasional tidak dapat beroperasi di Timor-Leste. Hingga akhir 1979, Pemerintah Indonesia memang menyalurkan bantuan ke beberapa kamp yang berada di bawah kendalinya, tetapi dalam jumlah yang sangat jauh dari kebutuhan. Bukti dari semua ini dapat dilihat dengan meningkatnya angka kematian. Indonesia juga tidak mengizinkan diberikannya bantuan kemanusiaan untuk wilayah-wilayah yang berada di luar kendalinya. Baru pada September 1979 pemerintah Indonesia mengizinkan dua lembaga bantuan internasional untuk melakukan program bantuan secara luas di daerah tersebut.

Sebelum September 1979

210. Sebelum September 1979, pemerintah Indonesia memberikan beberapa syarat untuk memenuhi kebutuhan penduduk di kamp-kamp tersebut. Secara resmi, pemerintah Indonesia mensyaratkan bahwa setiap bantuan dari sumber-sumber internasional harus disalurkan melalui pemerintah Indonesia; bantuan kemanusiaan akan disalurkan melalui Palang Merah Indonesia yang bertindak sebagai lembaga yang bertanggung jawab di lapangan.²⁰⁴

211. Pemerintah beberapa negara memberikan bantuan untuk Timor-Leste melalui pemerintah Indonesia yang kemudian disalurkan oleh Palang Merah Indonesia. Pemerintah Australia memberikan bantuan berupa uang pada Oktober dan November 1976, dan juga pada September 1978. Pemerintah Selandia Baru melakukan hal yang sama pada akhir 1978.²⁰⁵

212. Pada Januari 1979, World Vision Australia dan Pemerintah Australia mengapalkan makanan ke Dili. Tetapi pihak Australia tidak diizinkan menyertakan tenaga pemantau. Mereka juga tidak menerima laporan apapun tentang pendistribusian makanan tersebut. Tidak adanya pertanggungjawaban menjadi masalah dalam semua pengiriman bantuan antarpemerintah untuk Timor. Australian Council for Overseas Aid (ACFOA – Dewan Bantuan Luar Negeri Australia) melaporkan bahwa pihaknya telah menerima beberapa surat dari Timor-Leste mengenai masalah tersebut. Salah satu dari surat itu berbunyi:

Barang-barang dari kapal *Alanna Fay* yang disewa pemerintah Australia, yang tiba di Dili Januari 1979, dan obat-obatan yang diterbangkan dari Selandia Baru, dijual di Toko Vong Vung di Kampung Bairo Central di Dili dan toko lain, yakni Casa Vitoria.²⁰⁶

Gereja

213. Pemerintah Indonesia juga mengizinkan beberapa bantuan disalurkan melalui Gereja Katolik. Bantuan Gereja pertama dikelola oleh Uskup Antonius Pain Ratu, SVD dari Kota Atambua, Indonesia. Melalui Delegasi Sosial (Delsos) dan dengan bantuan dari ordonya, yaitu Society of the Divine Word (SVD), gereja tersebut

mendapat bantuan dari sebuah organisasi di Jerman yang tertarik pada Timor-Leste dan dari Catholic Relief Services (CRS) Amerika Serikat.

214. Padre Stanislaus Bessin, misionaris SVD di Atambua ketika itu, menuturkan kepada Komisi bahwa pada April 1976 ia membantu menyiapkan pengapalan 100 ton bantuan makanan pertama. Gereja tidak menyalurkan bantuan tersebut langsung ke Timor-Leste sebab tentara Indonesia bersikeras truk-truk yang memuat bantuan tersebut diserahkan kepada mereka. Tentara kemudian membawa truk itu dan berjanji akan menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Antara Desember 1976 dan Maret 1977, Pendeta Bessin membantu menyiapkan lebih banyak bantuan makanan ke Timor-Leste. Dengan menggunakan truk-truk sewaan, gereja mengirim jagung, kacang-kacangan, sagu, dan beras dua kali seminggu. Ia tetap saja hanya diperbolehkan untuk mendampingi pengiriman kargo tersebut sampai di perbatasan Kota Balibó (Bobonaro). Setelah itu tentara mengambil alih iring-iringan truk itu dan berjanji akan menyalurkannya. Padre Bessin tidak dapat membuktikan apakah semua bantuan itu sampai pada mereka yang membutuhkan dan ia khawatir banyak dari bantuan tersebut telah dikorupsi oleh pihak tentara. Pada Juni 1978 ia meminta Gubernur Timor-Timur untuk mendistribusikan bantuan Gereja, tetapi gubernur mengatakan bahwa semua bantuan harus melalui tentara.²⁰⁷

215. Salah satu tempat yang benar-benar menerima bantuan Delsos dari Atambua adalah Kota Bobonaro, yang letaknya tak jauh dari perbatasan Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di atas, tentara Indonesia membatasi gerakan penduduk untuk keluar dari kota hingga mengakibatkan terjadinya kekurangan makanan dan kelaparan. Suster Consuela Martinez menuturkan kepada Komisi, ia menerima makanan, pakaian, selimut, dan obat-obatan dari Delsos sejak akhir 1976 hingga 1983. Palang Merah Indonesia menyalurkan bantuan yang dibawa truk-truk itu dan Suster Consuela Martinez menggunakannya untuk memberi makan kepada antara 120 dan 180 anak-anak setiap harinya.²⁰⁸

216. Meski demikian, kematian penduduk terus terjadi di Bobonaro. Suster Consuela diberitahu oleh pemerintah kecamatan bahwa sejak mereka menyerah kepada Indonesia pada Februari 1976 hingga awal 1977, lebih daripada 200 orang meninggal setiap bulannya. Jumlah kematian ini sedikit menurun pada awal 1977, tak lama setelah bantuan Delsos mulai berdatangan. Tetapi bantuan tersebut tetap tidak cukup untuk menekan angka kematian hingga tingkat normal. Jumlah kematian baru dapat diturunkan kembali setelah bantuan langsung internasional mulai berdatangan pada akhir 1979.²⁰⁹

217. Organisasi LPPS Katolik juga memberikan bantuan finansial ke Timor-Leste melalui Program Darurat dan Rehabilitasi Timor-Timur, yang diluncurkan pada September 1977. Bantuan organisasi ini mulanya dipimpin oleh Romo Zeegwaard MSC, dan dengan bekerja melalui Delsos Gereja Katolik Timor, Dili LPPS terus melakukan pekerjaannya secara diam-diam selama bertahun-tahun.²¹⁰

218. Laporan dari program ini yang ditulis pada awal 1979 menyebutkan bahwa sekitar Rp110 juta telah didistribusikan selama 18 bulan pertama pelaksanaan program tersebut. Dana yang berasal dari Gereja dan organisasi-organisasi sosial di Jerman, Belanda, Belgia, Austria, AS, Australia, Indonesia, dan Inggris ini digunakan untuk menyediakan makanan dan obat-obatan, membantu para janda dan anak yatim piatu, membangun perumahan, pertanian, peternakan, dan sekolah-sekolah. Laporan tersebut dibenarkan oleh pihak-pihak berwenang dari Indonesia yang mendistribusikan bantuan tersebut. Dalam laporan itu tercatat bahwa pada awal 1979 sangat sulit untuk mendistribusikan bantuan karena:

pemerintah lokal ingin memonopoli distribusi bantuan seperti ini, karena pertimbangan-pertimbangan keamanan dan sosial pendidikan... [dan karena itu] seorang pastor di suatu kota dilarang membeli beras dan jagung untuk didistribusikan kepada penduduk.²¹¹

219. Tak seorangpun warga asing yang terlibat dalam program Gereja diizinkan masuk Timor-Leste.²¹²

Laporan saksi tentang bantuan Pemerintah Indonesia

220. Banyak yang melaporkan kepada Komisi bahwa segera setelah menyerah, tentara Indonesia memberi mereka makanan. Mereka hanya tahu bahwa tentaralah yang memberi mereka makanan. Sering makanan itu berupa ikan asin, jagung lapuk (*batar fohuk* dalam bahasa Tetum), kadang-kadang dengan tepung beras atau tepung jagung. Setiap laporan yang disampaikan kepada Komisi menegaskan bahwa bantuan itu tidak cukup untuk bertahan hidup. Laporan Cosme Freitas dari Vemasse khusus mengatakan:

*Kami hanya menerima jagung lapuk yang dibagikan oleh ABRI, yaitu tiga rantang untuk dimakan oleh setiap kepala keluarga (KK) selama satu minggu. Akan tetapi jagung lapuk tiga rantang itu kami makan hanya untuk ukuran satu hari saja.*²¹³

221. Beberapa contoh lainnya terdapat dalam tabel berikut.

| Tanggal | Tempat | Jenis | Saksi | Bantuan makanan |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---|
| Sepanjang 1976-77 | Kota Bobonaro | Kamp permukiman | Suster Consuela Martinez HC | Sedikit jagung untuk setiap keluarga pada saat mereka menyerah, bergantung pada banyaknya anak. Setelah itu jumlah yang sama diberikan setiap dua minggu. |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------|---|--|
| Setelah Juli 1978 | Kota Modolaran, Hatolia (Hatolia, Ermera) | Kamp permukiman | Idelfonso dos Reis | Serantang jagung dan serantang ikan asin per orang per minggu. Habis dalam tiga hari. Bantuan hanya diterima empat kali, setelah itu tak ada bantuan lagi. |
| Setelah Agustus 1978 | Uma Metan, Mahakidan (Alas, Manufahi) | Kamp transit | Tomé da Costa Mangalhães; Mateus da Conceição | Jagung sekaleng susu kecil untuk setiap keluarga per minggu. Habis dalam dua hari. Hanya sekali, setelah itu tidak ada lagi. |
| Desember 1978 | Iliomar | Kamp permukiman | Fernando Amaral | Tiga rantang jagung per keluarga per minggu. |
| Februari 1979 | Kota Fatubessi (Hatolia, Ermera) | Kamp permukiman | Adriano Soares Lemos | Satu rantang jagung dan satu rantang beras per keluarga per minggu. Plus ikan asin dan garam. Tidak cukup. |
| November 1979 | Kota Railaco, Railaco Leten (Railaco, Ermera) | Kamp transit | Eufrazia de Jesus Soares | Jagung dua kaleng susu kecil dan serantang ikan asin, hanya sekali, dua minggu setelah tertangkap. Menyebabkan kematian karena <i>protein shock</i> [reaksi kejut akibat kekurangan protein yang berat]. |

222. Komisi juga mendengar bahwa makanan yang diberikan sering menyebabkan diare. Ildefonso dos Reis mengatakan banyak orang mati karena diare di kamp permukiman Modolaran di Hatolia pada pertengahan 1978. Kematian serupa juga terjadi di Railaco, Remexio, dan Aikurus karena bantuan makanan diberikan sesaat setelah tertangkap.²¹⁴ Banyak yang menduga makanan tersebut telah diracuni. Kemungkinan lainnya, Komisi meyakini bahwa para korban menderita kekurangan protein yang berat. Ketika orang yang kekurangan protein sangat berat memakan makanan yang kaya protein, dapat terjadi reaksi keras yang ditandai dengan menggigil, demam, kejang tenggorok, emfisema akut, muntah-muntah, dan diare. Kenyataan bahwa begitu banyak orang yang meninggal dengan cara seperti itu karena menyantap makanan yang diberikan kepada mereka menunjukkan betapa lalainya lembaga yang mengatur pemberian bantuan itu, yakni militer Indonesia.²¹⁵

Setelah September 1979

223. Pada September 1979, bantuan langsung dari dunia internasional mulai mengalir bagi mereka yang membutuhkan di Timor-Leste. Sebelum itu, yaitu selama dua tahun atau lebih, bencana kelaparan telah demikian hebatnya melanda beberapa wilayah Timor-Leste. Pertanyaan yang menjadi pertimbangan Komisi dalam bagian ini adalah: Mengapa bantuan internasional butuh waktu begitu lama untuk tiba di Timor-Leste?

224. Jawaban atas pertanyaan ini tentunya bukan karena mereka tidak mengetahui bahwa Timor-Leste membutuhkan banyak bantuan.

225. Catholic Relief Services (CRS) Amerika Serikat menuturkan kepada Komisi bahwa beberapa orang di jajaran tertinggi dalam organisasinya memiliki informasi yang dapat dipercaya tentang penderitaan rakyat Timor-Leste menjelang April 1977. CRS mengetahui hal ini dari Pastor Lieshout di Timor Barat, yang mengatur bantuan CRS untuk pengungsi Timor-Leste di Timor Barat. Informasi Pastor Lieshout diperoleh ketika ia melakukan beberapa kali kunjungan ke rumah Uskup Ribeiro di Dili.²¹⁶ Pastor José Alvaro Nolasco Santimano Meneses e Monteiro dari Dioses Dili menuturkan kepada Komisi bahwa ia menghadiri pertemuan para duta besar negara-negara di Jakarta, pada Juli 1977. Ia mengimbau agar mereka memberikan bantuan pangan kepada Timor-Leste.²¹⁷ Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada 6-7 September 1978 sebuah delegasi yang terdiri atas para duta besar asing, yang didampingi oleh sejumlah wartawan, mengunjungi Dili, Baucau, Maliana, dan Remexio. Kepada mereka diceritakan bahwa lebih daripada 125.000 orang telah turun dari gunung-gunung, dan 20.000-30.000 dari orang-orang itu berada dalam kondisi yang mengenaskan, karena menderita berbagai penyakit termasuk kolera, malaria, TBC, dan busung lapar berat. Duta besar Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan Jepang, menyerukan operasi bantuan internasional yang sangat mendesak. World Vision Indonesia mengunjungi Timor-Leste pada Oktober 1978 dan melaporkan bahwa 70.000 orang pengungsi, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak yang menderita malnutrisi, membutuhkan pertolongan segera. Salah satu anggota tim bercerita tentang anak-anak di Metinaro:

Mereka sangat kurus; kita bisa melihat tulang-tulang di tangan dan kaki mereka; sebagian begitu lemah sampai-sampai tidak bisa berjalan sendiri.²¹⁸

226. Jelas bahwa informasi mengenai situasi kemanusiaan sudah tersedia bagi pemerintah dan lembaga-lembaga bantuan asing untuk mengangkat perhatian serius mengenai situasi tersebut, selama lebih daripada dua tahun sebelum upaya pemberian bantuan benar-benar terlaksana.

Akses ke Timor-Leste ditolak

227. Beberapa lembaga bantuan ketika itu memang telah bertindak sesuai dengan apa yang mereka ketahui. CRS mengatakan bahwa sejak 1977 hingga 1978 mereka

telah secara teratur mengajukan permohonan untuk dapat masuk ke Timor-Leste.²¹⁹ Lembaga lainnya melayangkan permohonan serupa. Dalam waktu sedikit lewat satu tahun setelah pendudukan Indonesia, ACFOA, sebuah organisasi Australia yang menjadi payung dari sejumlah organisasi nonpemerintah yang terlibat dalam pekerjaan pemberian bantuan dan pembangunan, telah lima kali menyerukan agar ICRC dan lembaga-lembaga lainnya diizinkan masuk ke wilayah Timor-Leste.^{*} ICRC sendiri terus-menerus melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia di Jakarta untuk mendapatkan akses ke Timor-Leste untuk jangka waktu yang dapat diterima. ICRC ingin mendapat akses ke seluruh wilayah Timor-Leste, termasuk wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Fretilin.²²⁰ Pemerintah Indonesia menolak semua permohonan masuk ke wilayah Timor-Leste untuk menjajaki apa saja yang dibutuhkan di wilayah tersebut dan memberikan bantuan.

228. Namun, pada 1979 Indonesia mengubah kebijakannya dan setuju memberi izin kepada dua lembaga internasional, yakni Catholic Relief Services (CRS) dan ICRC. CRS menggunakan kesempatan ketika Pemerintah Indonesia berubah pendirian pada Januari 1979, yaitu ketika direktur eksekutif CRS, Uskup Edwin B. Broderik, mendapat dorongan dari Adam Malik, Wakil Presiden Indonesia ketika itu, untuk memulai program bantuan darurat. Namun, baru pada Mei 1979 Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan bagi CRS untuk melakukan penilaian terhadap kondisi di lapangan. Meskipun laporan penilaian CRS menyatakan bahwa terdapat 200.000 orang dalam kondisi kelaparan yang serius atau kritis, baru empat bulan kemudian program bantuan tersebut benar-benar dapat terlaksana. Pada saat program bantuan itu benar-benar terlaksana, yaitu pada September 1979, CRS memperkirakan jumlah penderita busung lapar serius atau kritis telah meningkat hingga 300.000.

229. Pada akhir 1978 dan awal 1979 situasi berubah drastis. Gelombang orang yang sakit dan lemah turun dari wilayah pergunungan di Timor-Leste dan membanjiri permukiman di pesisir dan desa-desa.²²¹

230. Keadaan ini seolah memberi kesan bahwa baru pada akhir 1978 itulah situasi menjadi kritis. Padahal ini bukanlah situasi yang sesungguhnya. Sebenarnya warga Timor-Leste telah mulai keluar dari hutan-hutan dalam jumlah besar, paling tidak sejak akhir 1977, dengan kondisi yang sama memprihatinkan dengan mereka yang turun dari Gunung Matebian pada akhir 1978, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai sumber mulai dari pemerintah Indonesia sendiri, para biarawan dan biarawati, hingga para duta besar dan wartawan yang mengunjungi Timor-Leste pada September 1977.

231. Komisi tidak memiliki informasi tentang keputusan internal pemerintah dan tentara Indonesia. Namun demikian, Komisi yakin bahwa kemungkinan besar alasan bagi perubahan dalam kebijakan bantuan asing tersebut adalah fakta bahwa menjelang 1979 tentara Indonesia telah berhasil mencapai tujuan militer utamanya:

* ACFOA mengeluarkan imbauannya pada Desember 1975, April 1976, Oktober 1976, Februari 1977 dan September 1977

menghancurkan basis resistansi besar yang terakhir di Gunung Matebian; secara signifikan melemahkan Resistansi bersenjata yang terorganisasi; dan mengendalikan sebagian besar penduduk.

232. Komisi merasa sangat beralasan untuk menyimpulkan bahwa sebelum ketiga tujuan tersebut tercapai, tentara Indonesia melihat bantuan kemanusiaan internasional sebagai penghalang potensial untuk menaklukkan gerakan resistansi dan khususnya memaksa penduduk yang sudah putus asa dan kelaparan agar menyerah di bawah kendali mereka. Selain itu, mereka tetap melakukan kontrol yang ketat terhadap setiap pengunjung asing di Timor-Leste, agar operasi militer yang dilakukannya di wilayah itu tidak diawasi oleh pihak asing manapun.

233. Lebih jauh lagi, ketika akhirnya mereka benar-benar mengubah kebijakannya tentang bantuan darurat kemanusiaan, Pemerintah Indonesia hanya mengizinkan CRS dan ICRC untuk bekerja di Timor-Leste, dan mensyaratkan keduanya untuk bersikap *low profile*, misalnya tidak mengumumkan imbauan penggalangan dana. Mereka terus menolak akses dari organisasi-organisasi bantuan lainnya, termasuk Oxfam dan ACFOA.

Survei dan program bantuan CRS

234. Ketika CRS dan ICRC akhirnya diizinkan melakukan survei tentang kebutuhan di Timor-Leste, mereka menemukan penduduk yang hancur oleh kelaparan dan kematian.

235. Pada Mei 1979, direktur program Catholic Relief Services untuk Indonesia, Frank Carlin, membuat penilaian tentang kondisi di Timor-Leste. Ia mengunjungi penduduk di 16 lokasi, yang hidup di bawah kendali Indonesia. CRS belakangan menjelaskan apa yang ditemukannya seperti di bawah ini:

Situasi yang diamati di sejumlah lokasi oleh Mr. Carlin, yang telah ditempa pengalaman bekerja memberi bantuan di Asia selama 14 tahun, adalah salah satu dari penderitaan manusia yang terburuk, yang disebabkan oleh sakit, lapar, dan kelaparan. Angka kematian begitu tinggi. Jumlah orang yang mengalami sakit parah dan sekarat tidak hanya terbatas pada mereka yang usianya sangat muda dan sangat tua—yang normalnya paling dulu meninggal karena sakit dan kelaparan. Banyak orang yang sekarat ketika mereka sedang menjalani usia terbaiknya. Ada sejumlah besar anak usia remaja dan pemuda dewasa yang mengalami kondisi marasmus,* suatu kondisi yang telah menggerogoti tubuh mereka hingga mereka tak lebih daripada kerangka berjalan. Malnutrisi berat hampir dialami

.....
* Marasmus adalah bentuk “kering” (kurus, kurus kering) dari kekurangan gizi, yang disebabkan oleh kondisi mendekati kelaparan dengan kekurangan nutrisi yang mengandung protein dan nonprotein. Bentuk “basah” (edematous, bengkak) dikenal dengan nama kwashiorkor, terjadi ketika kekurangan protein lebih nyata daripada kekurangan kalori.

setiap anak. Karena perut mereka yang membusung dan tungkai mereka yang kurus, anak-anak harus memegang rok mereka yang compang-camping dengan satu tangan agar jangan sampai melorot. Sebagai perbandingan, sejumlah kecil anak yang tidak terkena kondisi ini tampak normal.

Di sejumlah tempat yang dikunjungi, orang-orang hanya memiliki sedikit harta: sebuah panci, selebar alas tidur, dan mungkin sedikit makanan dari petugas lokal. Pakaian yang mereka kenakan sedikit lebih baik daripada gombal. Penyakit merajalela di kamp-kamp. Penyakit seperti malaria dan influenza, yang merupakan penyakit serius dalam keadaan normal sekalipun, menyebabkan kematian yang tinggi di antara orang-orang yang menderita malnutrisi berat. Masalah kesehatan lainnya, seperti kudis, conjunctivitis, dan borok tropis, umum didapati. Dalam memberikan makanan kepada orang-orang ini harus diterapkan kehati-hatian karena mereka bertahan hidup dengan makanan yang tidak mengandung protein. Jika mereka diberikan makanan dengan konsentrasi protein yang terlalu tinggi, sistem pencernaan mereka tidak akan dapat menyerapnya, yang akan membuat mereka mengalami *protein shock* dan akhirnya meninggal dunia. Banyak kasus *protein shock* yang disaksikan oleh Mr. Carlin. Sementara tak terlihat kondisi yang serius di mana-mana di wilayah Timor-Leste, di tempat-tempat yang didatangi oleh orang-orang yang baru saja turun dari gunung-gunung, Mr. Carlin menemukan kondisi yang sangat kritis.²²²

236. Pada September 1979, ketika CRS telah dapat memulai bantuannya, mereka memperkirakan jumlah orang yang menderita “kondisi kelaparan serius atau kritis” mencapai 300.000.²²³ Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, jumlah ini sama dengan jumlah orang yang diyakini berada di kamp-kamp yang dikendalikan oleh Indonesia pada akhir 1978. Mengingat kondisi fisik mereka dan kurangnya akses terhadap makanan, tampaknya banyak dari mereka yang diidentifikasi oleh CRS membutuhkan pertolongan segera dan mereka memang para tahanan di kamp-kamp. Itu berarti bahwa pada September 1979, sekitar 55% (menurut angka Pemerintah Indonesia) dari penduduk Timor-Leste yang hidup diduga mengalami kondisi yang serius atau kritis.*

237. Program CRS merupakan program terbesar dari dua program pemberian bantuan darurat kemanusiaan. CRS dan ICRC setuju membagi pekerjaan mereka sehingga ICRC berkonsentrasi pada 60.000 orang yang kondisinya paling parah, sementara CRS berkonsentrasi pada sisanya yang berjumlah 240.000. Bantuan CRS yang pertama mencapai Dili pada September 1979. Bantuan itu segera disalurkan

.....
* Pemerintah Indonesia memperkirakan penduduk Timor-Timur pada Juni 1979 berjumlah 533.176. Setahun kemudian, perkiraan yang tepat adalah 555.350 {Dikutip dari ‘East Timor: how many people have died?’ hal.22-24, ACFOA *Development Dossier* no.1, Juli 1980, edisi kedua; Timor Timur dalam angka: 1988, Dili: Bappeda Tk. I, Kantor Statistik Propinsi Timor-Timur, 1989, h.27}.

untuk sekitar 120.000 orang dan kemudian diperluas untuk sekitar 240.000 orang di sekitar 120 permukiman (lihat Tabel 6: Kamp permukiman pada akhir 1974, untuk nama-nama permukiman).

Survei dan program bantuan kemanusiaan ICRC

238. Pada April 1979, delegasi ICRC melakukan survei awal dan menemukan “puluhan ribu orang yang dipindahkan dengan operasi militer sedang menghadapi bahaya kelaparan dan jika tidak dikirim bantuan secepatnya kondisi itu akan diperburuk dengan ketiadaan perawatan medis.”²²⁴ Survei awal ini diikuti dengan survei yang dilakukan pada akhir Juli 1979 di 13 desa atau kamp yang kondisinya diketahui buruk. Delegasi ICRC memperkirakan bahwa 60.000 dari 75.230 orang yang ada di tiga belas tempat tersebut berada dalam “kondisi malnutrisi yang memprihatinkan” termasuk “20.000 orang yang sekarat karena lapar.” Dengan mengabaikan sikap *low-profile* yang menjadi sikap ICRC selama ini, para delegasi itu secara terbuka menyatakan situasi tersebut sebagai “sama buruknya dengan Biafra dan potensial menjadi seserius Kamboja”. Koordinator medis ICRC untuk program bantuan tersebut mengatakan “ia merasa sangat tertekan atas apa yang dilihatnya; sesuatu yang jarang terjadi.”²²⁵

239. Sebagaimana ditunjukkan sebelumnya (lihat Tabel 7), angka-angka dari CRS menunjukkan tingginya angka kematian di Luro (479 per bulan) dan Iliomar (305 per bulan)—kedua tempat tersebut juga ada dalam daftar ICRC. Komisi juga telah mendapat bukti tentang betapa buruknya kondisi di Laclubar, Uatolari, Natarbora, dan Lolotoe. Semuanya merupakan tempat strategis, yang sebagian besar berada di gunung-gunung. Tentara Indonesia menghalang-halangi penduduk untuk meninggalkan kota-kota tersebut, yang masing-masing merupakan tempat ditahannya beberapa ribu orang. Sungguh sulit membayangkan dampak traumatis dari jumlah kematian yang masif itu terhadap komunitas yang kecil ini.

240. Bantuan ICRC mulai tiba di Dili pada Oktober 1979. Bantuan itu dikelola bersama Palang Merah Indonesia. Bantuan pertama segera disalurkan ke Hatolia dan Laclubar. Dalam enam bulan pertama operasi pemberian bantuan diharapkan 1.800 ton jagung, 360 ton beras, 1.080 ton kacang-kacangan, 216 ton minyak sayur, 270 ton bubuk susu, dan 180 ton biskuit protein dapat didistribusikan kepada 60.000 orang. Menjelang 1981 program bantuan pangan ICRC telah berhasil menjangkau 80.000 orang di 15 permukiman.²²⁶ ICRC menganggarkan 7 miliar dolar Australia untuk tahap pertama operasi, yang hampir separuhnya dialokasikan untuk mengangkut bantuan dengan menggunakan helikopter.²²⁷

* Komunikasi ICRC, 21 Agustus 1979. Disebutkan dalam Waddingham et al. Tempat-tempat yang disebutkan adalah Uatolari, Iliomar, Luro, Abafala, Ceisal, Ostico, Cassa, Zumalai, Hatolia, Fatubessi, Natarbora, Laclubar, dan Dilor.

Kontrol dan pembatasan

241. Program bantuan dari CRS dan ICRC dikenai kontrol militer Indonesia yang sangat ketat. Alih-alih mempermudah, campurtangan militer justru sering mempersulit program bantuan tersebut. Submisi CRS kepada Komisi menunjukkan bahwa semua keputusan pemerintah di Timor-Leste, termasuk mengenai hal-hal yang berkenaan dengan operasi CRS, dikendalikan oleh Letnan Jenderal Benny Moerdani, yang pada 1979-1980 menjabat sebagai Asisten Intel Menteri Pertahanan dan Keamanan (Asintel Hankam) dan Wakil Ketua Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Jenderal Moerdani terlibat secara mendalam dalam perencanaan invasi ke Timor-Leste pada 1975 dan Timor-Leste tetap menjadi bidang kompetensinya.²²⁸

242. Keamanan ketika itu sangat ketat sampai-sampai CRS Jakarta tak diizinkan untuk menelepon kantornya di Dili, sehingga mengharuskan CRS meminta langsung pada Jenderal Moerdani untuk mengizinkan adanya sambungan telepon. CRS juga memintanya untuk melakukan campurtangan langsung ketika sebuah helikopter ditarik untuk digunakan oleh industri minyak. Jenderal Moerdani memveto program pemberian makan di sekolah yang telah diusulkan sebelumnya dan menghalangi penunjukan Pastor Locatelli sebagai manajer proyek program pengembangan yang telah diusulkan pada 1981. Mungkin veto ini jugalah yang telah menggagalkan usulan untuk merekrut tenaga dokter dari Indonesia untuk CRS.²²⁸

243. Di lapangan, telah terjadi kekurangan angkutan truk yang seharusnya dapat dibantu penanggulangannya oleh organisasi militer yang memiliki puluhan ribu prajurit di lapangan. Karena keadaan yang demikian, CRS harus membangun armada truknya sendiri dengan mencarter truk-truk pribadi, memperbaikinya, lalu menyewa truk-truk rusak milik pemerintahan sipil itu. Truk-truk inipun kadang-kadang diminta kembali oleh pemiliknya untuk mereka gunakan sendiri.²²⁹

244. Kehadiran ICRC yang sebenarnya di Timor-Leste selama program bantuan darurat berlangsung, sangat minimal. Distribusi yang sesungguhnya dilakukan oleh para personil Palang Merah Indonesia. Hal ini jauh berbeda dengan tingkat kehadiran ICRC di Timor-Leste sebelum invasi Desember 1975 ketika bencana kelaparan tidak terjadi di wilayah itu.²³⁰

245. Gilman dos Santos, yang bekerja untuk CRS pada 1979, memberikan kesaksian yang sangat berharga tentang skala dan sifat krisis kemanusiaan pada waktu itu dan terbatasnya kemampuan lembaga-lembaga bantuan untuk mengatasinya. Selama bekerja dengan CRS, Gilman dos Santos melakukan perjalanan ke semua distrik di seluruh Timor-Leste dan mengamati kondisi masyarakat serta peran tentara Indonesia:

.....
* "Perjanjian yang ditandatangani antara CRS dan Departemen Dalam Negeri merupakan alat yang sah untuk melegitimasi CRS di Timor-Leste... Namun pada kenyataannya, perjanjian dengan Departemen Dalam Negeri ini tidak memiliki kekuatan yang sesungguhnya karena semua keputusan mengenai masalah Timor-Leste sebenarnya dikendalikan oleh ASSINTEL HANKAM. Hal ini ditunjukkan dalam surat di bagian sampul yang menyertai perjanjian tersebut ketika dikirim ke CRS/ NY. Situasi ini telah diakui oleh USAID..." (Lampiran Patrick C. Johns, Direktur CRS Indonesia, untuk Donald J. Crosson, Direktur CRS Wilayah II, 15 Desember 1980, dalam submisi CRS, Lampiran 4).

Pada tahun 1979 CRS tiba. Kehadiran organisasi-organisasi internasional pada tahun 1979 akibat kelaparan parah di segala penjuru Timor-Leste. Bantuan ini datang satu tahun setelah adanya laporan-laporan tentang kunjungan para duta besar. Bayangkan, satu tahun kemudian! Namun ini tetap membantu. Pada waktu itu kami tidak pernah mendengar siapapun dari PBB yang berkunjung, meskipun kami berada dalam konflik besar. Saya ingin mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan yang datang itu terlambat, tetapi bantuan ini juga menyelamatkan banyak orang. Bantuan ini sangat terlambat karena Timor ditutup. Bahkan penduduk Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Para wartawan, baik dari Indonesia atau luar negeri, tidak dapat melaporkan apa yang sedang terjadi di sini. Kami bahkan tidak dapat menelepon bagian lain Indonesia. Timor sangat tertutup, sangat tertutup dan diawasi ketat oleh militer Indonesia. Karena pengawasan yang ketat ini, CRS meninggalkan Timor setelah lima tahun menjalankan misi kemanusiaan di sini

Ketika bepergian dari Dili ke Baucau saja kami harus berhenti tiga belas kali di tiap Kodim dan Koramil untuk cek surat-surat. Kami sudah punya 26 tanda tangan tetapi mereka akan butuh lebih lagi... Ada beberapa orang militer yang sangat membantu, di Vemasse contohnya, dan di Turisca dan Alas... Untuk mengatasi masalah-masalah dengan militer kami beritahu mereka bahwa makanan itu datang dari Amerika. Kami tunjukkan bendera AS di paket-paket tersebut, dan para prajurit Indonesia sangat takut kepada orang Amerika.²³¹

246. Komisi mencatat bahwa bantuan tidak didistribusikan dengan merata kepada mereka yang membutuhkan. Menurut Gilman dos Santos, CRS tidak dapat mendistribusikan bantuan kemanusiaan dengan cara yang secara politis netral:

CRS diizinkan membagikan makanan hanya kepada penduduk di wilayah-wilayah yang diawasi ABRI. Kami tidak dapat membagikannya kepada orang-orang di pergunungan. ABRI tidak ingin makanan dibagikan kepada orang-orang di pergunungan, karena mereka pikir dengan cara itu mereka dapat memaksa orang-orang turun dan menyerah.²³²

247. Komisi juga mendengar kesaksian mengenai dugaan bahwa tentara Indonesia telah menyalahgunakan bantuan. Menurut Gilman dos Santos, barang-barang bantuan sering terlihat di pasar lokal atau diambil untuk keperluan pribadi:

Tugas kami pergi ke kabupaten atau kecamatan dan menghitung jumlah keluarga. Lalu mereka akan melapor kembali dan memberi 10 kg makanan untuk tiap orang dan dengan bantuan medis. Seharusnya kami [langsung] menyalurkan makanan tersebut tetapi dipaksa menyerahkannya kepada pos Koramil. Mereka tidak akan izinkan kami memberikan begitu banyak makanan pada satu kali pembagian,

karena mereka bilang bantuan ini akan diberikan kepada Fretilin. Mereka hanya memberikan 5 kg. Mereka seharusnya menyerahkan 5 kg sisanya ketika pasokan yang baru dikirim oleh CRS. Sisanya kata mereka, mereka makan sendiri atau jual atau pakai sebagai bayaran untuk program-program pembangunan (walaupun pemerintah sudah menyediakan dana untuk ini). Atau mereka menukarnya dengan telur, ayam, dan lain-lain... Kami tahu makanan dijual oleh ABRI di tempat-tempat tersebut dan kami melaporkan hal ini ke kantor pusat CRS di Dili: Maubisse, Ermera, Hato Builico, Liquiça, Manatuto, Baucau, Lospalos, Laga, dan Suai. Bantuan pakaian disortir dan pakaian yang bagus diambil militer. Jika pekerja CRS menentang, ia akan dipukul dan diancam pakai pistol: "Kamu pasti salah satu Fretilin—kubunuh kau."

Kami diberitahu orang-orang, dan kadang-kadang kami lihat sendiri, bahwa bantuan dijual oleh tentara dari Kodim atau Koramil ke toko-toko setempat atau ke penduduk yang kaya. Sering kali diberikan begitu saja kepada anggota keluarga mereka.²³³

248. Dalam wawancara terpisah dengan Komisi, Pastor Eligio Locatelli dari Fatumaca, (Baucau) membenarkan dugaan itu:

*Beberapa orang Cina pemilik toko dipaksa membeli bantuan beras dari tentara dan menjualnya lagi di toko mereka. Satu orang Cina menemui pastor-pastor khawatir tentang hal ini, yang terpaksa mereka lakukan.*²³⁴

Dampak program bantuan terhadap penduduk

249. Selama berlangsungnya program darurat kemanusiaan (5 September 1979-Desember 1980), CRS mengirim 17.000 ton makanan, 430 ekor sapi, 195 ton beras, dan 326 ton biji jagung. CRS mendaku telah menjangkau 240.000 orang. Dalam Laporan Akhirnya tanggal 18 Maret 1981, CRS menyatakan bahwa berdasarkan data yang dikumpulkan di sepuluh lokasi tempatnya bekerja, program yang dijalandkannya berhasil menurunkan angka kematian dengan tajam.

Pada Januari 1979 hingga Juli 1979, jumlah kematian rata-rata per bulan adalah 1.296; pada September 1979 hingga Januari 1980, angka tersebut turun menjadi 70, yang secara jelas menggambarkan dampak positif program pemberian makanan tersebut.²³⁵

Komentar penutup

250. Dari data yang telah dikumpulkan, Komisi mengakui kondisi penduduk yang sangat memprihatinkan ketika mereka menyerah kepada angkatan bersenjata Indonesia. Namun, Komisi percaya bahwa bencana kelaparan terjadi karena

tentara Indonesia telah lalai dengan tidak memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok setelah penduduk tinggal di kamp-kamp permukiman yang ada di bawah kendalinya. Dari bukti-bukti yang telah terkumpul, Komisi percaya bahwa bagi penduduk yang telah menyerah, bencana kelaparan mulai terjadi sekitar 1978 dan terus berlanjut hingga sedikitnya setahun, hingga September 1979.

251. Kelaparan tidak disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak biasa (lihat Box: El Niño bukanlah penyebab terjadinya kelaparan, di bawah ini). Komisi percaya bahwa jika tentara mengatur atau mengizinkan pengiriman bantuan makanan, atau membiarkan penduduk kembali ke rumah mereka di desa dan menggarap ladang dan kebun mereka, bencana kelaparan tidak akan terjadi di Timor-Leste. Tetapi tentara tidak mengizinkan penduduk melakukan hal tersebut karena tujuannya utamanya adalah mengalahkan Fretilin/Falintil. Tujuan ini pula yang membuat militer melanjutkan tindakannya mencegah distribusi bantuan ke wilayah-wilayah yang berada di luar kendalinya, bahkan setelah lembaga-lembaga internasional diizinkan memasuki Timor-Leste.

252. Singkatnya, Komisi percaya bahwa kebijakan dan praktik militer Indonesia bertanggung jawab langsung atas bencana kelaparan di Timor-Leste antara 1978-1979.

El Niño bukan penyebab kelaparan

Beberapa orang berpendapat bahwa kelaparan di Timor-Leste pada 1978-1979 lebih disebabkan oleh kekeringan ketimbang tentara Indonesia. Misalnya, duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia ketika itu, Edward Masters, menuturkan kepada Kongres AS setelah kunjungannya ke Timor pada September 1979, bahwa hujan pada tahun itu hanya 25% bila dibandingkan dengan hujan pada musim terdahulu. Meskipun ia mengatakan bahwa kelaparan terjadi karena faktor perang dan lingkungan, ia pada akhirnya bersaksi tentang kekeringan dan praktik-praktik pertanian lokal, dengan mengesampingkan dampak perang dan penggunaan kamp-kamp pengasingan.²³⁶

Kekeringan berkepanjangan yang terjadi secara periodik yang disebabkan oleh El Niño mulai terjadi antara Februari dan April. Hal ini dapat mengakibatkan kekeringan atau terlambatnya musim hujan di bulan-bulan berikutnya. Selama periode konflik di Timor-Leste, El Niño yang cukup signifikan terjadi lima kali, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Di waktu-waktu lain curah hujan tampak normal.²³⁷

El Niño dapat mengubah cuaca dalam dua hal. Ia dapat menunda mulainya musim hujan, atau mengurangi jumlah curah hujan selama musim hujan berlangsung. Jika waktu mulainya musim hujan terlambat, panen juga akan terlambat dan simpanan makanan selama

musim kemarau akan habis sementara orang-orang menunggu datangnya hujan. Tetapi, para petani Timor- Timur biasanya beralih ke sumber makanan lain pada saat-saat seperti itu, misalnya bahan makanan yang tumbuh liar. Jadi, peristiwa terlambatnya musim hujan bukanlah penyebab utama terjadinya kelaparan. Jika curah hujan selama musim hujan hanya sedikit, akibatnya akan lebih buruk karena hasil panen akan sangat sedikit atau mungkin benar-benar gagal. Ini dapat menyebabkan kekurangan makanan hingga panen berikutnya.

Komisi menemukan bahwa hanya sedikit data tentang jumlah curah hujan pada masa lalu di Timor-Leste yang dapat diperoleh dengan bebas. Meskipun demikian, John McBride dari Biro Meteorologi Australia (Australian Bureau of Meteorology) menyusun suatu analisis mengenai potensi dampak El Niño terhadap Timor-Leste dari sejumlah data curah hujan pada masa lalu, baik dampaknya terhadap Dili maupun sejumlah kota di bagian timur kepulauan Indonesia, yang muncul dalam situs web yang dapat diakses publik.²³⁸ Data ini menunjukkan bahwa El Niño pada Februari 1977 hingga April 1978 terjadi kurang lebih ketika kelaparan yang serius berlangsung di Timor-Leste. Tetapi, El Niño seperti itu adalah salah satu dari yang paling ringan yang terjadi di Timor-Leste. Curah hujan selama musim hujan hanya berkurang 7% dari normal. Memang musim hujan ketika itu datangnya terlambat, tetapi ini, seperti yang kita lihat, bukan masalah besar. Terlebih lagi, pada 1979 El Niño tidak terjadi.

Tabel 9: Perubahan El Niño dan curah hujan di Timor-Leste

| El Niño | Mulainya musim hujan | Berkurangnya Musim Hujan | Yang berpotensi kekurangan potensi makanan |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| [bulan kekurangan pangan] | | | |
| Feb 1977-Apr 1978 | 70 hari terlambat | 7% | Apr 1978 |
| Apr 1982-Jul 1983 | 40 hari terlambat | 53% | Apr 1983-Apr 1984 |
| Feb 1991-Jun 1992 | 10 hari lebih awal | 22% | dampaknya kecil |
| Mar 1994-Jun 1995 | 30 hari lebih awal | 68% | Apr 1995-Apr 1996 |
| Mar 1997-Apr 1998 | tepat waktu | 71% | Apr 1998-Apr 1999 |

Sumber: http://www/bom.gov.au/bmrc/clfor/cfstaff/jmb/east_timor_5.html

Data curah hujan untuk wilayah ujung timur kepulauan Indonesia itu tidak meyakinkan. Curah hujan rata-rata untuk seluruh pantai utara Timor-Leste (yang dikenal dengan DMP91) tidak menunjukkan jumlah yang lebih rendah daripada curah hujan normal pada 1979.

Curah hujan tersebut berdasarkan pada tiga atau empat stasiun. Tetapi, antara Januari dan April 1979, Dili sangat kering dan mengalami masa-masa kekeringan pada bulan-bulan itu. Selama 1979, curah hujan di Dili adalah 31% di bawah normal (bukan 75% di bawah normal sebagaimana yang diduga sebelumnya). Akan tetapi, Dili jauh lebih kering bila dibandingkan dengan wilayah lain di Timor-Leste. Dili berada di pantai utara, yang menerima curah hujan yang jauh lebih sedikit daripada daerah pergunungan di pantai selatan. Rendahnya curah hujan di Dili bukan merupakan indikator yang baik untuk menunjukkan kekeringan yang terjadi di daerah-daerah pertanian di Timor-Leste. Kami tidak memiliki data tentang daerah-daerah tersebut. Kota-kota lain di kepulauan bagian timur seperti Kendari (Sulawesi Tenggara) dan Waingapu (Sumba), pada masa itu juga mengalami sedikitnya curah hujan. Beberapa daerah menerima cukup curah hujan, yaitu Kupang (Nusa Tenggara Timur) dan Saumlaki (Maluku Tenggara). Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) mendapat curah hujan di atas rata-rata pada bulan pertama 1979.

Dengan demikian, data tersebut tidak cukup untuk benar-benar meyakinkan bahwa pada 1979 tidak terjadi kekeringan. Meski begitu, beberapa alasan menunjukkan bahwa 1979 bukanlah tahun kekeringan untuk seluruh wilayah Timor-Leste. Alasan tersebut adalah: tidak ada El Niño, curah hujan yang rata-rata normal di sepanjang wilayah pantai utara (DMP91), dan tidak ada kekeringan di kota-kota sekitar wilayah pantai utara. Karena itu Komisi tidak yakin bahwa curah hujan (baik terlambat maupun tidak ada) merupakan faktor yang cukup signifikan untuk menyebabkan kelaparan pada 1978-79. Hanya tindakan tentara Indonesia, yang telah dijelaskan dalam bab ini, yang dapat menjelaskan tentang kelaparan tersebut.

Beberapa peristiwa El Niño yang lebih serius terjadi pada 1974-1999. Beberapa memang menyebabkan terjadinya kekurangan makanan. 1983, 1995, dan 1998 merupakan tahun-tahun kekeringan yang cukup parah. Kelaparan terjadi di beberapa bagian wilayah Timor-Leste pada 1983-1984 yang sebagian mungkin disebabkan oleh kekeringan. Meski begitu, tidak satupun dari tahun-tahun kelaparan ini seburuk bencana kelaparan yang terjadi pada 1978-1979. Rakyat Timor-Leste secara umum mampu menanggulangi kelaparan. Masalah yang sebenarnya adalah perang dan tindakan militer Indonesia.

Pemindahan paksa dan kelaparan terlokalisir pada dasawarsa 1980-an

253. Pemindahan paksa, yang mengakibatkan kekurangan pangan yang terlokalisasi dan kadang berujung pada kematian, terus berlangsung pada dasawarsa 1980-an. Dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan, Komisi menemukan bahwa terdapat kebijakan dengan dua pola utama pemindahan paksa dalam periode ini, yaitu:

- relokasi ke daerah permukiman baru untuk mendapatkan pengawasan militer yang lebih baik terhadap penduduk
- relokasi dan konsentrasi di sebuah daerah yang dibatasi, sebagai pembalasan atau penghukuman secara kolektif atas serangan terhadap sasaran-sasaran militer Indonesia

254. Selama awal dasawarsa 1980-an pasukan-pasukan resistansi menyusun kekuatan kembali dan melancarkan sejumlah serangan terlokalisasi terhadap unit-unit ABRI, seperti serangan Marabia (Dili) pada 10 Juni 1980, pemberontakan Kablaki (Ainaro dan Manufahi) pada 20 Agustus 1982, dan pemberontakan Kraras (Viqueque) serta Lautém pada 8 Agustus 1983. Serangan-serangan ini diikuti oleh operasi pembalasan yang berupa pemindahan terhadap ribuan penduduk sipil di daerah-daerah sekitar, dengan dampak kemanusiaan yang sangat buruk.

255. Pada awal 1980-an, ribuan pemuda direkrut secara paksa untuk bergabung dalam operasi-operasi militer guna mencari Falintil. Perekrutan paksa besar-besaran ini berpengaruh pada kegiatan-kegiatan pertanian, demikian pula pada ketahanan pangan. Namun untuk pelaporan dalam bab ini, perekrutan paksa penduduk sipil tidak dibahas secara luas, melainkan dibahas dalam Bab 7.7: Pelanggaran hukum perang.

Pembongkaran kamp-kamp permukiman: relokasi strategis

256. Memasuki 1980-an militer Indonesia telah menguasai sebagian besar daerah pedalaman. Banyak kamp permukiman yang ditutup. Sebagian penduduknya pulang kembali ke desa masing-masing, sementara beberapa orang tetap terkurung di lokasi-lokasi tempat mereka dimukimkan setelah menyerah, di bawah pengawasan ketat yang sama. Yang lainnya mengalami pemindahan dari desa ke desa selama beberapa tahun sebelum akhirnya diperbolehkan kembali ke desa asal mereka. Namun ada sebagian lainnya yang dipindahkan ke desa-desa relokasi strategis, kadang disebut 'permukiman baru', yang biasanya terletak di dekat jalan-jalan utama. Keputusan itu tampaknya diambil dengan berbagai pertimbangan keamanan dalam hal aksesibilitas ke desa-desa asal para penghuni kamp tersebut.

257. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kebijakan perpindahan dibuat untuk membantu penduduk. Di bagian-bagian Indonesia seperti Kalimantan dan Sulawesi, pemerintah juga memindahkan penduduk dari daerah-daerah terpencil untuk tinggal di kota-kota atau daerah dekat jalan-jalan besar dengan akses yang

lebih mudah kepada sekolah, klinik, dan pasar. Kebijakan itu adalah bagian dari program pembangunan daerah pemerintah. Di Timor-Leste, pihak berwenang sering mengatakan bahwa alasan mereka membangun desa-desa baru ini adalah untuk memudahkan pemberian layanan-layanan kepada penduduk terpencil, atau karena praktik pertanian berpindah telah merusak tanah di daerah-daerah yang sebelumnya ditinggali oleh penduduk yang dipindahkan ke desa-desa baru, sehingga mematikan produksi pertanian.

258. Komisi mencatat bahwa ada aspek-aspek positif dalam kebijakan pemindahan. Bahkan setelah kemerdekaan, banyak orang Timor-Leste yang memilih untuk menetap di kota-kota dan desa-desa di mana mereka telah ditempatkan. Meskipun demikian, bukti dalam bab ini menunjukkan bahwa untuk menggambarkan pemindahan paksa ini sebagai bagian dari program pembangunan daerah merupakan hal yang menyesatkan. Penggambaran seperti ini mengabaikan kenyataan bahwa di Timor-Leste pemindahan ini diselenggarakan oleh militer dengan tujuan-tujuan militer. Dokumen militer memperjelas bahwa alasan utama diciptakannya desa-desa baru itu adalah untuk memindahkan orang dari daerah-daerah tempat Resistansi berlangsung aktif. Khususnya di tahun-tahun awal, program ini tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat, melainkan justru menimbulkan kelaparan. Sebagai akibatnya banyak orang yang segera pindah dari desa-desa relokasi ini begitu mereka bisa.

259. Pembentukan desa-desa relokasi terjadi dengan cara yang berbeda-beda. Sering desa-desa ini dibangun oleh pekerja paksa yang tidak diupah. Sebagian di antaranya adalah desa yang sudah ada, yang berkembang lebih besar saat militer mengosongkan daerah pedalaman di sekitarnya dan memindahkan penduduknya ke tempat-tempat ini. Dalam beberapa kasus, seluruh komunitas direlokasikan ke desa-desa yang sudah ada di sepanjang jalan-jalan utama, yang sering menyebabkan perselisihan atas tanah dan sumber alam. (Lihat Bab 7.10: Hak ekonomi dan sosial.) Beberapa kamp yang sudah dibangun kemudian menjadi desa-desa strategis karena rakyat terus ditahan di sana.

Pemindahan pada dasawarsa 1980-an: pilihan-pilihan

Kembali ke desa asal

260. Serangkaian pedoman militer telah ditulis pada 1982. Pedoman tersebut berisi informasi terperinci mengenai strategi angkatan bersenjata Indonesia untuk menciptakan keamanan di daerah-daerah di Distrik Baucau yang masih tergolong “rawan”, dan memberi wawasan ke dalam pemikiran militer tentang pemindahan pada saat ini. Salah satu pedoman itu memperjelas pemikiran militer bahwa mengembalikan orang-orang ke desa asal mereka akan berdampak baik bagi keamanan:

Subdistrik Laga direncanakan sebagai relokasi desa Soba ke [Boleha], dan relokasi desa [Tekinomata] ke Sama Guia. Apabila pemukiman-pemukiman dibangun di kedua tempat ini, akan mungkin mengontrol bagian utara Gunung Matebian dan wilayah Susugua.

Sementara itu, pemerintahan subdistrik Baguia telah mengajukan rancangan bahwa desa [tidak dapat dibaca] harus dikembalikan ke tempat semula di wilayah Bahatata sementara desa Lari Sula harus sementara ini dimukimkan kembali di wilayah Caidawa... pembukaan wilayah-wilayah pemukiman baru ini akan membuka jalan ke [Uato Carbau].²³⁹

261. Satu pedoman lain berisi analisis mengenai satu desa, yaitu Bualale yang berada di lereng Matebian, di mana penduduknya telah diizinkan untuk pulang dari Kota Quelicai pada 1982 dalam konteks umum “pembangunan seutuhnya”.²⁴⁰ Diakui bahwa penduduk di Kota Quelicai tidak dapat menanam lahan mereka, karena itu mereka tidak memiliki makanan yang cukup. Ini dijadikan satu alasan untuk mengembalikan mereka ke Bualale. Tetapi ada satu alasan lain, berdasarkan pertimbangan keamanan, yaitu bahwa Bualale adalah desa asal David Alex, komandan Kompi Brigade Merah 2, dengan demikian berpotensi menumbuhkan dukungan bagi Resistansi. Meskipun demikian, pedoman itu memperjelas bahwa militer Indonesia yakin bahwa pengembalian penduduk justru dapat memperkuat keamanan di daerah itu. Beberapa langkah telah dilakukan dengan harapan akan membuahkan hasil ini. Sebagian besar keluarga yang sanak saudaranya masih berada di hutan telah dikirim ke Pulau Atauro. Seorang kepala desa baru dipilih, yang dianggap dapat mendukung tujuan-tujuan Indonesia. Masyarakat dianggap “ikut serta dengan cukup baik dalam keamanan maupun pembangunan”, walaupun diakui bahwa karena intimidasi oleh Fretilin dan “karena sebab-sebab lain” sebuah jaringan resistansi masih dianggap beroperasi di desa itu. Di sana ada sepuluh Hansip dan satu peleton Ratih, dan 50 orang lagi yang disiagakan untuk dikerahkan sewaktu-waktu.

262. Satu pedoman militer lain memberi indikasi adanya dampak sesungguhnya dari prioritas keamanan militer terhadap masyarakat desa. Dalam bagian mengenai “Meningkatkan Pengendalian Penduduk” ditentukan pengawasan ketat dan pembatasan bergerak. Pedoman tersebut menginstruksikan unit-unit yang beroperasi di desa-desa agar “setiap kegiatan penduduk harus dapat diketahui dengan pasti.” Pedoman itu menganjurkan dibentuknya jaringan-jaringan informan, mewajibkan surat jalan untuk perjalanan keluar desa, mendirikan pos-pos pemeriksaan di sekitar desa, dan mengadakan pengabsenan atau inspeksi mendadak, dan patroli ke rumah-rumah.²⁴¹

263. Diskusi Komisi dengan penduduk Bualale mengenai kehidupan mereka selama pendudukan Indonesia mengungkap bagaimana penduduk desa itu memandang aturan yang dipaksakan oleh militer kepada mereka, setelah mereka kembali ke rumah mereka:

1981: *Kurang lebih ada 20 penduduk Bualale yang dicurigai sebagai ‘GPK’ [Gerombolan Pengacau Keamanan] dan ditangkap oleh Batalion 521 serta dibawa ke Quelicai. Mereka ditahan selama satu tahun. Selama dalam tahanan, aktivitas mereka mencakup hal-hal berikut ini: membangun aula pertemuan di Quelicai, mendirikan*

klinik kesehatan, dan bekerja paksa memperbaiki jalan-jalan di sekitar kota Quelicai ... Pada tahun itu [1981] kira-kira lima keluarga yang dicurigai oleh [ABRI] berkomunikasi dengan Falintil dipaksa pindah ke Ataúro. Pada saat itu masyarakat juga menjadi lebih takut dan terguncang karena selalu berada di bawah kecurigaan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di hutan (Falintil). Seorang perempuan, Eugenia, dari aldeia Lialura, meninggal akibat kelaparan di Ataúro... Keberangkatan tiga keluarga ke Ataúro tidak terjadi karena tidak ada kapal. Jadi mereka tetap di Bualale, namun mereka hidup terus menerus diancam oleh [ABRI] yang selalu melemparkan tuduhan bahwa mereka adalah 'GPK' atau 'Fretilin'.

1982-83: Baru [pada 1982] penduduk Desa Bualale yang telah menetap di kamp Quelicai dikirim pulang ke desa mereka, yakni Desa Bualale.

Pada saat ini penduduk Desa Bualale selalu dicurigai karena ada satu kelompok dari desa itu yang masih berada di hutan, dan [ABRI] selalu melakukan hal-hal berikut ini:

- Memerintahkan para perempuan menyiapkan makanan bagi Hansip yang ditugaskan ke Bualale*
- Mengadakan hiburan-hiburan (tarian/dansa) dengan para perempuan setiap malam*
- Memaksa para perempuan yang anak-anaknya masih kecil untuk berpartisipasi dalam hiburan tersebut*
- Memaksa para perempuan untuk melakukan penjagaan malam.*

Pada saat itu Batalion Zipur 9 (109) dan Tim Saka (Railakan) yang dipimpin oleh Julião Fraga menyiksa para penduduk dan ada seseorang, yaitu Mateus dari aldeia Lialura, yang disiksa hingga mati...

1984-86: Pada tahun-tahun ini semua berlangsung seperti di atas.²⁴²

Desa-desa baru

264. Sering penduduk desa dipindahkan dari kamp-kamp permukiman ke desa-desa yang benar-benar baru yang terletak di tempat yang dianggap oleh militer lebih aman daripada desa asal mereka.

265. Selama 1979-81 penduduk dari enam desa di Subdistrik Quelicai (Baucau)—Quelicai, Guruça, Afaça, Abafala, Uaitame, dan Bualale—dipaksa pindah dari kamp-kamp di Kota Quelicai ke sebuah permukiman baru di pesisir yang disebut Kampung Mulia, yang terletak di antara Desa Tequinaumata dan Seiçal. Kurang lebih 205 keluarga dipaksa pindah ke Mulia, karena desa asal mereka dekat dengan hutan dan dianggap bahwa mereka mungkin akan memberi bantuan kepada Falintil. Ketika waktunya tiba bagi para penduduk Guruça dan Afaça untuk pindah, mereka menolak meninggalkan desa mereka. Semua harta benda mereka dibawa keluar rumah. Rumah-

rumah itupun dibakar, panen dan ternak mereka juga dimusnahkan, dan beberapa penduduk dipukuli serta ditikam. Kemudian mereka dinaikkan ke truk-truk tentara dan dibawa ke Mulia dengan pengawalan ketat.²⁴³ Masyarakat Uaitame mengingat bahwa pada 8 Januari 1979 tentara-tentara Indonesia di bawah komando seorang perwira Pasukan Khusus (Kopassandha) datang dari Laga untuk memindahkan keenam ratus penduduk Uaitame dari Quelicai Kota ke Mulia. Pada awalnya orang-orang itu menolak pergi namun keesokan harinya komandan Kopassandha dan anak buahnya kembali dan memaksa para penduduk desa menaiki ketigabelas truk yang mereka bawa sambil menembakkan senjata ke udara dengan sembarangan.

266. Beberapa bulan pertama di lokasi baru bagi mereka adalah saat-saat yang paling sulit. Penduduk Uaitame menceritakan kepada Komisi kondisi kehidupan mereka ketika mereka tiba di Mulia:

Masyarakat di Mulia tidak punya rumah, tempat tidur, alat masak, makanan, pakaian, dan lain-lain. Akhirnya mengakibatkan banyak lebih kurang 250 orang yang mati karena kelaparan dan sakit. Pada waktu itu masyarakat yang mati dikuburkan tanpa pakaian (telanjang) dengan tidak dialas (peti), sehari lebih kurang 8-10 yang mati sangat melarat dan sengsara.²⁴⁴

267. Setelah tiga atau empat bulan masyarakat mulai menerima makanan melalui Gereja Katolik. Dua bulan kemudian pemerintah setempat memberi mereka lembaran seng untuk atap agar dapat membangun rumah.²⁴⁵

268. Situasi membaik dengan sangat lambat. Pembatasan kebebasan bergerak menyebabkan penduduk Mulia terus menerus mengalami kekurangan makanan, karena mereka tidak dapat bertani di luar lingkungan sekitar mereka. Kondisi hidup mereka masih sangat sederhana dan tidak ada akses terhadap perawatan medis. Akibatnya, menurut sebuah sumber yang tidak ingin diidentifikasi, orang-orang yang mati terus bertambah selama periode ini. Pada 1980, CRS dan ICRC mulai menyalurkan bantuan di Kampung Mulia. Militer Indonesia pun mulai melonggarkan kebebasan bergerak, mengizinkan penduduk mencari lahan yang cocok ditanami yang jauh dari rumah mereka, walaupun mereka masih diwajibkan membawa surat jalan.²⁴⁶

Perpindahan yang berulang

269. Penduduk dari beberapa desa tidak diizinkan kembali ke rumah mereka selama bertahun-tahun. Dalam kasus seperti ini, setelah pembongkaran kamp-kamp permukiman, masyarakat sering dipindahkan beberapa kali sebelum diperbolehkan menetap lagi di desa asal mereka.

270. Penduduk Lelalai (Quelicai, Baucau) mengalami hal ini. Mereka bercerita kepada Komisi mengenai bagaimana bertahun-tahun mereka sering dipindahkan dan dikuasai oleh milisi, Tim Saka, yang didukung oleh tentara Indonesia sebelum mereka diizinkan pulang ke desa asal mereka:

1982. Penduduk suco Lelalai dipindahkan lagi ke wilayah suco Aba, di sana mulai menginstruksikan kepada masyarakat guna membangun sekolah darurat di suco Aba tetapi anak-anak mereka tetap tidak pergi ke sekolah karena tidak mempunyai pakaian...

1984-1986. Masyarakat dipindahkan lagi ke suco Laisorulai dan di situ diawasi ketat oleh milisi Tim Saka dengan pimpinannya Julião Fraga dan kawan-kawan. Pada saat itu semua masyarakat diberi izin mencari makanan, namun pada sore hari mereka harus kembali ke "kamp konsentrasi". [Ketika mereka keluar untuk cari makanan] diperintah harus membawa kemiri dan kopra guna memberikan kepada mereka [milisi], apabila ada yang tidak bawa [kemiri dan kopra] maka dia, walaupun perempuan atau laki-laki, akan disiksa, dipukul, dan direndam dalam air yang diisi di drum.

1987. Diinstruksikan oleh komandan Tim Saka kepada seluruh penduduk suco Lelalai, bahwa kalian bisa pulang ke kampung halaman masing-masing, dengan catatan: membuat kebun dengan menanam tanaman kemiri, kelapa, jati sebanyak 12 hektar, setelah selesai bisa pulang atau pindah ke suco atau desa kalian. Pada waktu itu tidak ada perhatian dari pemerintahan, kehidupan masyarakat suco Lelalai hidup atau mati bergantung pada komandan Tim Saka.

1988. Setelah masyarakat suco Lelalai berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh komandan Tim Saka...langsung diberi perintah oleh komandan Tim Saka untuk pindah ke kampung halamannya masing-masing. Tetapi kehidupan masyarakat masih tetap tidak bebas atau normal. Semua aktivitas masyarakat masih tetap seperti tahun-tahun yang lalu.²⁴⁷

Pembatasan yang berlanjut di daerah-daerah permukiman

271. Seperti yang sudah dikemukakan, ketika orang-orang kembali ke Subdistrik Iliomar (Lautém) pada akhir 1978, mereka tidak diperbolehkan kembali ke desa asal mereka, melainkan ditempatkan di daerah-daerah permukiman strategis. Penduduk Desa Iliomar II, yang sebelumnya pernah tinggal di daerah Kampung Lama yang jaraknya sekitar tiga kilometer di selatan Kota Iliomar, direlokasikan di sebuah daerah di utara Desa Ailebere dan selatan Iliomar I. Seluruh penduduk Desa Fuat, yang sebelumnya pernah tinggal di daerah Bubutau di utara Maluhira, terkonsentrasi berdekatan dengan pinggir utara Iliomar I. Penduduk desa dari Cainliu, termasuk mereka yang berasal dari *aldeia* Larimi, dipaksa menetap di daerah yang sekarang menjadi sekolah menengah pertama dan gereja, dengan penduduk desa dari Dusun Caidabu dipindahkan tidak jauh dari daerah itu. Penduduk Desa Tirilolo juga dimukimkan dekat gereja.

272. Di daerah permukiman Kota Iliomar, para penduduk desa hanya diizinkan bertani dalam jarak 500 meter dari desa baru mereka, dan harus mendapat

persetujuan dan surat jalan untuk pergerakan yang lebih jauh. Langkah-langkah ketat ini dimaksudkan untuk memutus pasokan kepada Resistansi dengan mengucilkan masyarakat sipil dari Falintil yang masih berada di hutan. Karena tidak mendapatkan akses kepada kebun dan ladang tradisional mereka, penduduk desa menderita kelaparan dan kesulitan yang cukup berat.²⁴⁸

273. Pada 1982 penduduk empat desa di Subdistrik Iliomar diizinkan kembali ke desa mereka. Meskipun demikian, bagi penduduk Desa Iliomar I dan Iliomar II, situasi itu tidak berubah: mereka dipaksa menetap di daerah permukiman mereka hingga 1988.

274. Orang Iliomar menderita kelaparan dan kesengsaraan yang cukup berat pada 1984-1985. Penduduk Tirilolo dan Cainliu sudah diperbolehkan kembali dari permukiman Kota Iliomar ke lokasi desa asal mereka pada 1981. Penduduk sub-desa Larimi telah dipindahkan ke daerah yang berbatasan dengan Dusun Liafalun, Cainliu pada 1982. Walaupun demikian, bagi mereka pun akses ke sebagian besar ladang mereka tetap dibatasi oleh pasukan keamanan Indonesia, tetapi kondisinya lebih berat lagi bagi penduduk Desa Iliomar I dan Iliomar II, yang belum diizinkan kembali ke tempat asal mereka.²⁴⁹ ICRC menjalankan program pemberian makanan darurat di Iliomar dari 1979 sampai 1981. Program ini kemudian dilanjutkan oleh UNICEF dari pertengahan 1982, tetapi tertunda pada 1983 ketika terjadi peningkatan aktivitas militer Indonesia di daerah itu.²⁵⁰ Mário Viegas Carrascalão, yang pada waktu itu menjabat sebagai gubernur Timor Timur, menceritakan bahwa “kenangannya yang paling pahit adalah ketika bencana kelaparan melanda Distrik Iliomar pada 1985”²⁵⁰

275. Pada 1988 militer Indonesia menggunakan strategi baru untuk penduduk Iliomar II dengan memindahkan mereka dari *posto* di Iliomar ke daerah Iradaruta, di pinggir timurlaut desa asal mereka. Akibatnya terbentuk sebuah desa relokasi strategis: tujuannya, seperti yang dikatakan oleh penduduk Iliomar II kepada Komisi, adalah untuk “memutus rute Falintil dan mendukung operasi militer di daerah itu.” Warga masyarakat itu juga mengatakan kepada Komisi bahwa tujuan militer tidak dapat tercapai karena masyarakat tidak memberi mereka informasi.²⁵¹

Redistribusi penduduk

276. Relokasi paksa terhadap penduduk, pertama selama penyerahan diri dan penangkapan pada 1977-1979 dan belakangan ketika terjadi pemindahan paksa selanjutnya, mengakibatkan perubahan radikal pada pola permukiman di Timor-Leste. Daerah-daerah seutuhnya dikosongkan dari penduduk, yang dipindahkan ke tempat-tempat baru, beberapa di antaranya sebelumnya tidak berpenghuni.

.....
* Ramos-Horta, 1987: hal.196. Budiardjo, 1984: hal.94 mengutip laporan Fretilin yang komprehensif mengenai kondisi-kondisi: “di Luro ... kelaparan adalah pendamping yang tetap bagi orang-orang di sini yang tidak memiliki bahan pangan samasekali ... Semua yang dapat dikatakan mengenai kondisi-kondisi di kamp Iliomar adalah bahwa mereka sama buruknya dengan kondisi di Luro”.

277. Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan populasi di berbagai subdistrik antara 1970 dan 1980. Walaupun kedua set angka ini harus dibandingkan dengan hati-hati,* mereka jelas menunjukkan perubahan besar dalam distribusi penduduk. Sebagian besar kasus-kasus ini adalah akibat langsung dari operasi-operasi militer Indonesia pada 1977-1978 dan pemindahan paksa sesudahnya.

278. Pada umumnya, daerah-daerah tempat penduduknya menurun sekali adalah daerah di hutan atau pergunungan terpencil, seperti Barique/Natarbora (Manatuto), Fatuberliu (Manufahi), Lolotoe (Bobonaro), Lacluta (Viqueque), Turiscail (Manufahi), Maubisse (Ainaro), Mape/Zumalai (Covalima), Lacló (Manatuto), Quelicai (Baucau), Luro (Lautém), Fatululik (Covalima), Baguia (Baucau), dan Laclubar (Manatuto). Banyak dari daerah-daerah ini pernah menjadi benteng Resistansi pada akhir 1970-an, dan sudah barang tentu mengalami banyak kematian. Kemudian, setelah penghancuran basis-basis Resistansi pada 1977-78, militer Indonesia memindahkan banyak penduduk yang masih hidup keluar dari daerah-daerah ini, dengan harapan bahwa sisa-sisa Resistansi akan terputus dukungannya.

279. Sebaliknya subdistrik lainnya memiliki lebih banyak penduduk pada 1980 daripada 1970, jauh lebih banyak daripada peningkatan yang dapat diakibatkan hanya oleh kelahiran alami. Hal ini terjadi karena rakyat yang masih hidup sesudah perang berpindah ke tempat-tempat ini. Kebanyakan dari tempat-tempat ini adalah ibukota distrik, yang terletak di sepanjang jalan utama dan di dataran rendah. Beberapa contohnya adalah Kota Dili, Manatuto, Viqueque, Baucau, Atabae (Bobonaro), Lautém/Moro, Lospalos, Maliana (Bobonaro), Hato Udo (kemudian di Manufahi, sekarang di Ainaro), dan Bobonaro. Subdistrik di Oecussi tumbuh karena alasan yang berbeda. Di Oecussi tidak ada perang dan tidak ada pemindahan. Pada akhir 1970-an penduduk sipil asal Indonesia mulai menetap di Oecussi. Pertumbuhan di Dili juga sebagian disebabkan oleh imigrasi orang Indonesia.

* Pada penurunan data yang diperoleh dari sensus 1970 dan 1980, lihat Bag. 7.6: Profil pelanggaran hak asasi manusia.

Tabel 10: Perubahan populasi subdistrik 1970-1980

| Distrik | Subdistrik | 1970 | 1980 | %perubahan |
|----------|--------------------|--------|--------|------------------|
| | | | | Penurunan |
| Ainaro | Maubisse | 20.119 | 10.409 | -48,3 |
| | Turiscari | 5.981 | 2.890 | -51,7 |
| Baucau | Baguia | 12.239 | 8.138 | -33,5 |
| | Laga | 14.914 | 13.989 | -6,2 |
| | Quelicaí | 18.780 | 11.258 | -40,1 |
| | Vemasse | 5.727 | 4.977 | -13,1 |
| | Venilale | 11.736 | 11.148 | -5,0 |
| Bobonaro | Balibó | 30.743 | 13.179 | -57,1 |
| | Cailaco | 6.753 | 5.240 | -22,4 |
| | Lolotoe | 11.689 | 4.502 | -61,5 |
| Covalima | Fatululik | 1.899 | 1.215 | -36,0 |
| | Fatumean | 2.379 | 2.164 | -9,0 |
| | Fohorem | 4.677 | 3.515 | -24,8 |
| | Mape/Zumalai | 13.494 | 7.043 | -47,8 |
| Dili | Aileu | 26.217 | 9.241 | -64,8 |
| | Remexio | 7.851 | 4.880 | -37,8 |
| Ermera | Atsabe | 15.325 | 10.668 | -30,4 |
| | Hatolia | 20.743 | 15.096 | -27,2 |
| Lautém | Luro | 8.212 | 5.205 | -36,6 |
| Liquiça | Bazartete | 16.610 | 8.997 | -45,8 |
| | Liquiça | 16.416 | 8.895 | -45,8 |
| | Maubara | 14.610 | 11.450 | -21,6 |
| Manatuto | Barique/ Natarbora | 5.744 | 1.683 | -70,7 |
| | Laclo | 6.512 | 3.578 | -45,1 |
| | Laclubar | 15.316 | 10.611 | -30,7 |
| | Laleia | 3.169 | 1.695 | -46,5 |
| Manufahi | Alas | 5.034 | 3.574 | -29,0 |
| | Fatuberliu | 8.942 | 3.074 | -65,6 |
| | Same | 18.438 | 17.250 | -6,4 |
| Viqueque | Lacluta | 9.965 | 4.132 | -58,5 |
| | Ossu | 16.655 | 12.022 | -27,8 |
| | Uato Carbau | 6.071 | 5.802 | -4,4 |

| | | | | Peningkatan |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Ainaro | Ainaro | 8.985 | 10.428 | 16,1 |
| | Hato Builico | 6.829 | 8.459 | 23,9 |
| Baucau | Baucau | 20.398 | 25.317 | 24,1 |
| Bobonaro | Atabae | 5.013 | 6.346 | 26,6 |
| | Bobonaro | 11.085 | 20.480 | 84,8 |
| | Maliana | 7.508 | 12.233 | 62,9 |
| Covalima | Suai | 13.484 | 15.250 | 13,1 |
| | Tilomar | 3.272 | 3.501 | 7,0 |
| Dili | Ataúro | 3.133 | 5.206 | 66,2 |
| | Dili | 28.516 | 62.874 | 120,5 |
| Ermera | Ermera | 18.506 | 18.816 | 1,7 |
| | Letefoho | 11.410 | 11.501 | 0,8 |
| Lautém | Iliomar | 4.136 | 5.435 | 31,4 |
| | Lautém/ Moro | 7.088 | 9.143 | 29,0 |
| | Lospalos | 10.992 | 15.693 | 42,8 |
| | Tutuala | 2.200 | 2.623 | 19,2 |
| Manatuto | Manatuto | 5.703 | 6.875 | 20,6 |
| Manufahi | Hato Udo | 4.724 | 7.871 | 66,6 |
| Oecussi | Nitibe | 4.753 | 7.058 | 48,5 |
| | Oesilo | 5.922 | 7.296 | 23,2 |
| | Pante Makassar | 10.698 | 17.034 | 59,2 |
| | Passabe | 4.379 | 5.722 | 30,7 |
| Viqueque | Viqueque | 14.665 | 17.986 | 22,6 |
| | Uatolari | 13.911 | 14.683 | 5,5 |
| Total | | 610.270 | 555.350 | |

Sumber: 1970: *Repertição Provincial dos Serviços de Estatística. 1972, "Recenseamento Geral da População e da Habitação (as 0 horas[?] de 30 de Dezembro de 1970)." Lisabon (laporan yang tidak diterbitkan).* (Pelayanan Statistik Propinsi 1972 sensus umum penduduk dan kediaman (pada pukul 12:00 30 Desember 1970) (laporan yang tidak diterbitkan)

1980: *Biro Pusat Statistik, Penduduk Propinsi Timor Timur 1980: Hasil Pencacahan Lengkap, Kantor Statistik Propinsi Timor Timur, SP80-54.2, 1980.*

Relokasi setelah pemindahan: beberapa contoh

280. Untuk pemahaman yang lebih baik terhadap sifat dan dampak pemindahan paksa penduduk pada 1980-an, Komisi melakukan penelitian untuk mencatat pengalaman masyarakat tentang pemindahan dan akibat-akibatnya. Komisi percaya relokasi ini tidak diatur dengan cara yang menjamin perlindungan jiwa. Kebutuhan

utama masyarakat tidak terpenuhi, terutama selama periode transisi sebelum masyarakat yang direlokasi dapat menyokong kehidupannya sendiri.

Natar Ulun (Vemasse, Baucau)

281. Pada 1979 atau 1980 penduduk Caicua dan *aldeia-aldeia* lain yang terletak di bukit-bukit di belakang Kota Vemasse dipaksa pindah ke Natar Ulun, tiga kilometer di luar Vemasse. Karena keterpencilan Caicua (tidak ada jalan yang menghubungkan Caicua dan Vemasse), patroli-patroli Indonesia kesulitan memperoleh akses ke tempat tersebut. Manuel Alves Moreira mengatakan kepada Komisi bahwa militer Indonesia percaya bahwa penduduk Caicua mendukung Fretilin/Falintil dan bahwa sebagian penduduk telah lari ke hutan untuk bergabung dengan Resistansi.

282. Enam puluh sembilan keluarga dipaksa pindah. Mereka dipaksa membongkar rumah mereka dan mengemas semua harta benda mereka; lahan pertanian mereka diratakan untuk memastikan agar pasukan Falintil tidak dapat mengambil hasil panen mereka. Dengan membawa sedikit harta benda di punggung mereka, keluarga-keluarga itu dipaksa oleh para tentara berjalan melalui daerah yang bergunung-gunung menuju lokasi baru mereka, yakni Natar Ulun. Perpindahan ini memakan waktu tiga hari.²⁵²

283. Begitu mereka tiba, pergerakan mereka hanya terbatas pada daerah sekitar. Mereka mengalami kelaparan dan menderita penyakit akibat pembatasan ini. Manuel Alves Moreira bercerita bahwa selama tahun pertama antara dua dan lima orang mati setiap harinya karena kelaparan, malaria, kolera, dan TBC. Pada 1980, CRS dan ICRC mulai memberikan bantuan kemanusiaan. Pada saat yang sama militer Indonesia mulai memberikan sedikit kebebasan untuk pergi ke luar desa baru itu untuk bertani. Namun, pergerakan penduduk masih di bawah pengawasan ketat: mereka diwajibkan memperoleh surat jalan jika ingin bergerak ke luar desa itu, dan wajib melapor saat kembali. Situasi itu membaik dengan terbukanya akses kepada lahan-lahan pertanian, tetapi kontrol izin yang ketat masih berlanjut sampai 1988.²⁵³

Laclo (Laclo, Manatuto)

284. Setelah lari ke gunung-gunung Hatu Konan, penduduk Laclo telah dipaksa keluar dari gunung-gunung oleh pengeboman berulang-ulang, dan menyerah di Ilimano (Uma Kaduak, Laclo) pada Juli 1978, kemudian dibawa ke kamp di Metinaro (Dili) di mana 40.000 orang yang menyerah sudah ditahan. Manuel Carceres da Costa mengatakan kepada Komisi bahwa belakangan dia diperbolehkan pindah kembali ke Kotapraja Laclo pada Agustus 1979. Kepindahan itu pun tidak mudah. Pertama-tama hanya laki-laki yang diperbolehkan pergi, dan hanya sejauh jembatan dekat Manatuto di mana mereka tinggal selama sebulan. Kemudian para tentara membawa para laki-laki ke Laclo, tempat mereka mendirikan barak-barak untuk ditempati. Para perempuan menyusul pada Oktober. Tentara-tentara dari Batalion 405 menjaga komunitas itu selama

tiga bulan. Tanah di kota itu berbatu-batu dan keras, tetapi para tentara tidak mengizinkan mereka pergi ke kebun lama mereka di luar kota. Selama masa itu rakyat menderita kelaparan dan banyak yang mati akibat penyakit dan kelaparan. Manuel Carceres mengingat ada 15-20 orang yang mati setiap harinya selama periode ini. Baru pada awal 1980-an tentara mulai memberi kebebasan kepada rakyat untuk pergi ke luar untuk berkebun:

Kami ditahan di “kamp konsentrasi” selama tiga bulan. Lebih dari 300 orang dari Hatu Konan yang meninggal. Setelah banyak orang yang meninggal, militer Indonesia mengembalikan orang-orang ke tanah asalnya. Waktu itu tinggal 400 orang saja yang tersisa.²⁵⁴

Lacluta (Viqueque)

285. José Andrade dos Santos memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai pemindahan paksa pada 1980 terhadap penduduk Desa Ahic (Lacluta, Viqueque) yang terletak di kaki Gunung Laline. Seperti yang telah dikemukakan, orang-orang dari Viqueque, Manatuto, Manufahi, Baucau, Ainaro, dan Dili telah dikumpulkan di Kota Lacluta setelah menyerah. Di bawah instruksi dari Camat Lacluta dan tentara-tentara dari Batalion 745, penduduk Ahic dan penduduk desa-desa lain di subdistrik itu dipindahkan ke Rade Uma, Dilor (Viqueque).

286. Dalam kesaksian mereka kepada Komisi, penduduk Ahic menggambarkan bahwa perlakuan yang mereka terima setelah perpindahan kurang lebih sama dengan ketika mereka masih berada di Kota Lacluta. Perempuan-perempuan terus menjadi sasaran perkosaan dan “kawin paksa”. Orang-orang yang memegang kedudukan di Fretilin dan mantan Falintil terus diinterogasi dan dianiaya. Semua laki-laki yang berumur di atas 15 tahun dipaksa melakukan ronda malam, dan jika mereka gagal menjalankannya, akan mendapatkan hukuman yaitu berjalan di atas abu yang panas dan berbaring di air kotor selama beberapa jam. Setidaknya ada satu orang, yaitu Carlos dari *aldeia* Halimean, yang dibunuh oleh ABRI, dan seorang lainnya, Mário Lopes, juga dari Halimean, yang dibawa ke Baucau dan menghilang. Para laki-laki juga harus melakukan kerja paksa. Mereka mendirikan tiga bangunan umum tanpa upah, termasuk sebuah klinik dan rumah-rumah untuk Koramil dan pejabat-pejabat pemerintah. Setelah itu mereka dipaksa mengerjakan sistem pemipaan/pengairan selama satu bulan. Penyaluran pangan, selimut, dan obat-obatan oleh ICRC pada 1980 membantu memperbaiki kondisi hidup, tetapi pembatasan kebebasan bergerak sejauh satu kilometer keluar desa terus berlanjut, sehingga sulit melaksanakan tugas-tugas rutin yang penting bagi kesejahteraan, seperti menanami kebun, memotong sagu, dan menggembala kerbau.²⁵⁵

287. Pada 1982 penduduk Uma Tolu, satu desa lain di Subdistrik Lacluta, yang juga telah dimukimkan di Dilor, dipaksa pindah ke Uma Lor di Desa Luca (Viqueque, Viqueque). Alasan pemindahan itu adalah “untuk mempermudah pengawasan ABRI terhadap daerah itu.”²⁵⁶ Operasi itu dipimpin oleh komandan militer, kepala polisi, dan pejabat-pejabat lain di Kecamatan Lacluta.²⁵⁷

Weberek, Weto (Alas, Manufahi)

288. Penduduk dari Desa Fahinehan, Bubususu, dan Caicasa (Fatuberliu, Manufahi) pada 1981 dipaksa pindah ke lokasi baru yang disebut Weberek, di *aldeia* Oeto (Dotik, Alas, Manufahi) karena mereka dicurigai memberi makanan dan dukungan kepada Falintil. Mereka dipaksa meninggalkan lahan pertanian mereka, yang kemudian dibakar dan dihancurkan oleh tentara Indonesia untuk mencegah Falintil mengambil sumber pangan yang ditinggal pergi. Sebagai orang-orang gunung yang dulunya tinggal di daerah subur, para penduduk desa kesulitan menyesuaikan hidup di dataran rendah yang panas dan berawa-rawa. Sebastião Magalhães mengatakan kepada Komisi: “Selama perpindahan itu banyak penduduk meninggal karena tidak tahan pada iklim terlalu panas dan kelaparan.”²⁵⁸

289. Militer Indonesia hanya menyediakan tenda terpal untuk tempat bernaung serta jagung dan nasi bermutu rendah untuk konsumsi darurat. Selama satu setengah tahun pertama orang-orang yang tinggal di Weberek menderita kekurangan gizi, malaria, kolera, dan TBC. Hanya setelah kedatangan ICRC pada pertengahan 1982 situasi ini mulai membaik. Angkatan bersenjata Indonesia mulai memperbolehkan para penduduk desa kembali ke lahan pertanian mereka yang subur untuk menanam pangan selama musim hujan, tetapi pada 1983 mereka dipindahkan kembali ke Weto dan lahan pertanian mereka dimusnahkan untuk kedua kalinya. Situasi ini berlanjut hingga 1990-an ketika beberapa orang kembali ke rumah asalnya. Sebagian lainnya pindah ke tempat-tempat yang dibangun oleh militer Indonesia di bawah program ‘transmigrasi lokal’ di kecamatan yang baru dibuka yaitu Weilaluhu.²⁵⁹

Gleno (Ermera, Ermera)

290. Gleno adalah kotapraja baru yang diciptakan untuk menggantikan Kota Ermera sebagai ibukota kabupaten. Kota itu dibangun di atas dataran sepanjang sungai beberapa kilometer di utara Kota Ermera. Gabriel Ximenes mengatakan kepada Komisi bahwa ia dipindahkan ke sebuah kamp permukiman di Kota Ermera bersama keluarganya setelah menyerah di Fatubessi pada Februari 1979. Tidak lama setelah keluarga itu diizinkan kembali ke rumah mereka di Ermera, tentara Indonesia membawa Gabriel dan sekitar seratus laki-laki lainnya dari Kota Ermera dan laki-laki dari Desa Ponilala, yang berada dekat situ. Keluarga mereka ditinggalkan di Kota Ermera. Militer memaksa mereka mulai membuka daerah yang tidak berpenghuni yang kemudian menjadi Kota Gleno. Setiap hari mereka disuruh membersihkan tetumbuhan di daerah yang ditentukan. Jika mereka gagal memenuhi kuota hariannya, mereka dihukum dengan disiksa. Gabriel Ximenes mengatakan bahwa tentara-tentara itu membunuh tiga orang laki-laki yang terlalu sakit untuk dapat bekerja. Mereka mengerjakan pembangunan kota baru itu selama empat tahun. Mereka tidak punya waktu untuk bercocok tanam, dan memperoleh makanan di pos-pos ABRI. Pada 1983, setelah pekerjaan itu selesai, ABRI tidak lagi memberi mereka makan dan tidak pula mengizinkan mereka kembali ke Kota Ermera. Justru, keluarga merekalah yang turun ke Gleno. Para laki-laki itu masih

tidak dapat berkebun dan dengan kedatangan keluarga mereka, terjadilah kelaparan dan beberapa orang meninggal. Baru pada 1985 militer mengizinkan mereka pindah dengan bebas. Gabriel Ximenes menjadi seorang pedagang kopi yang sukses.²⁶⁰

291. Komisi menerima banyak laporan lain mengenai pemindahan paksa di mana komunitas terpencil dipaksa pindah oleh militer Indonesia karena alasan keamanan. Tabel di bawah ini adalah rangkuman laporan-laporan terpilih dari diskusi-diskusi komunitas.

| Tabel 11: Rangkuman beberapa laporan terpilih dari diskusi komunitas | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Sumber | Lokasi dan Tanggal | Deskripsi |
| Profil Komunitas CAVR | Rotutu, Same, Manufahi 1981 | Sekitar 800 orang dari Desa Rotutu dipindahkan secara paksa oleh ABRI ke Raifusa (Alas, Manufahi), Ataúro, dan Aileu karena mereka dicurigai berkomunikasi dengan Falintil di hutan. |
| Profil Komunitas CAVR | Caicasa, Fatuberliu, Manufahi 1981 | Penduduk Desa Caicasa dipindahkan secara paksa oleh ABRI ke Welaluhu. Banyak yang mati akibat malaria dan kelaparan, dan akhirnya orang-orang itu dipindahkan kembali ke Fatuberliu. |
| Profil Komunitas CAVR | Soibada, Manatuto 1982 | F58, wakil gubernur, beserta ABRI memaksa kurang lebih 57 keluarga dari Soibada untuk pindah ke Desa Manehat untuk mendirikan pos-pos ABRI di sana. |
| Profil Komunitas CAVR | Fatisei, Laulara, Aileu 1984 | Penduduk Desa Fatisei dipindahkan secara paksa, sebagian ada yang dibawa ke Dili dan beberapa ke Kota Aileu, karena desa itu dicurigai adalah basis Falintil. Akibat pengiriman paksa, desa itu tidak didiami antara 1984 dan 1990. |

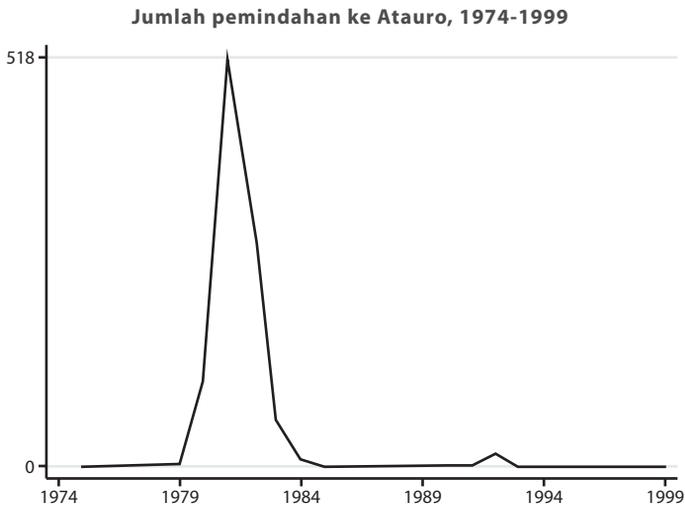
Penahanan balasan dan hukuman kolektif: Ataúro dan kamp-kamp penahanan lainnya

292. Pemberontakan-pemberontakan (*levantamentos*) terhadap sasaran militer Indonesia pada dasawarsa 1980-an memunculkan tanggapan baru dari militer Indonesia yang menghasilkan bentuk penahanan baru oleh militer Indonesia. Masyarakat dibawa ke kamp-kamp termasuk mereka yang terlibat langsung dalam pemberontakan itu, namun sebagian besar dari mereka langsung lari ke hutan setelah serangan-serangan itu. Sejumlah besar tahanan adalah sanak saudara dari

mereka yang telah menyerang pos-pos militer. Sering seluruh desa terkena imbas pembalasan Indonesia yang berat, yang menjadikan penahanan mereka sebagai hukuman kolektif. Interogasi dan penyiksaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam serangan-serangan itu (dan kadang sanak saudara mereka) dilakukan dengan brutal dan berlarut-larut, dan sering berujung pada kematian. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.)

Penahanan di Ataúro

293. Kamp-kamp penahanan yang paling mengerikan dan paling besar adalah di Pulau Ataúro (Dili). Komisi menerima kesaksian dan bukti dari berbagai sumber mengenai jumlah penduduk yang pernah ditahan di Ataúro pada saat yang berbeda. Komisi menyimpulkan bahwa jumlah penduduk yang dipindahkan dan ditahan di pulau itu memuncak pada sekitar September 1982 dengan angka di atas 4.000, walaupun berbagai sumber telah memberi angka yang jauh lebih tinggi dan secara kumulatif jumlah orang yang dikirim ke Ataúro antara 1980 dan 1984 mungkin telah melampaui 6.000.⁷



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

* Data yang diberikan dalam Amnesty International, *East Timor: Violations of Human Rights* (hal.71), yang berdasar pada berbagai sumber umum dan rahasia, menunjukkan angka orang-orang yang ditahan di Ataúro pada saat yang berbeda antara pertengahan 1980 dan akhir 1984. Perkiraan yang lebih tinggi berasal dari sejumlah sumber lain berkisar antara 5.000 dan 9.670, tetapi ini mungkin telah menghitung total kumulatif (lihat wawancara CAVR dengan Faustino Gomes da Sousa, Ataúro, Dili, 1 November 2003; Maria do Ceu Lopes da Silva Federer, Kesaksian kepada Audiensi Publik CAVR mengenai Pemencaraan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003; dan Wawancara CAVR dengan Luis da Costa Soares, Letefoho, Same, Manufahi, 23 Februari 2003).

294. Penahanan di Pulau Ataúro adalah kasus yang unik. Karena keterasingannya dari daratan utama Timor-Leste, tempat itu tidak memerlukan langkah-langkah pengamanan ketat seperti dilakukan di kamp-kamp permukiman dan desa-desa relokasi yang telah didiskusikan di atas.^{*} Ataúro mempunyai peran rangkap sebagai kamp penahanan untuk keluarga para pejuang resistansi dan sebagai penahanan untuk para individu yang terlibat langsung dalam resistansi (lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan). Tidak ada alasan yang jelas ataupun konsisten untuk relokasi-relokasi paksa yang dilakukan oleh pihak berwenang ini. Tidak ada bukti proses administrasi yang sesuai hukum ataupun formal untuk mendukung penahanan. Justru sebagian besar orang yang dikirim ke Ataúro pada umumnya adalah penduduk biasa, termasuk perempuan dan anak-anak, yang telah ditahan dalam kelompok-kelompok besar sebagai bagian dari operasi militer menumpas Resistansi, setelah terjadinya serangan terhadap pos-pos militer oleh Resistansi. Secara kontras, jumlah orang yang ditangkap sebagai anggota aktif gerakan klandestin dan dikirim ke Ataúro relatif kecil.[†]

Pemindahan paksa, penawanan, atau penahanan?

Orang-orang yang dikumpulkan dan dibawa paksa melawan kehendak mereka ke Pulau Ataúro menggunakan istilah-istilah yang berbeda untuk menggambarkan pengalaman mereka. Sebagian mengatakan bahwa mereka diasingkan di Ataúro. Yang lainnya mengatakan mereka ditahan atau dipenjara di sana.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional melarang pemindahan sewenang-wenang penduduk sipil. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan kebebasan memilih tempat tinggalnya.²⁶¹ Prinsip Panduan PBB

^{*} Pulau Ataúro digunakan sebagai pulau penjara selama periode kolonial Portugis. Menurut Vasco Lopes da Silva, pada 1937 para pembangkang dari Portugal dan koloni-koloninya mulai diasingkan ke Ataúro. Setelah Portugal memperoleh kembali kekuasaan atas Timor pada akhir Perang Dunia II, banyak orang Timor yang dikirim ke Ataúro karena diduga berkolaborasi dengan Jepang. Satu kelompok orang Timor lagi dikirim ke Ataúro pada 1959 setelah pemberontakan Viqueque.

[†] Satu contohnya adalah Mario Nicolau dos Reis yang ditangkap pada Desember 1980 bersama anggota kelompok klandestin yang beroperasi di Ostico, Baucau, dan dikirim ke Ataúro selama empat bulan (Wawancara CAVR dengan Mario Nicolau dos Reis, Baucau, 17 November 2002). Sebuah contoh lain adalah Adelino Soares, yang merupakan salah seorang anggota kelompok klandestin yang beranggotakan sembilan orang, yang ditangkap pada Maret 1982 di Uatolari, Viqueque, yang dikirim ke Ataúro pada Mei 1982 (Wawancara CAVR dengan Adelino Soares, Viqueque Kota, 27 Oktober 2003). Kira-kira dari Maret 1984, pihak berwenang Indonesia tampaknya menerima bahwa mereka yang ditahan di Ataúro terdiri atas kelompok-kelompok yang berbeda. Pada saat itu para tahanan diklasifikasikan sebagai 'tahanan', 'bekas tahanan', dan 'orang yang dipindahkan', dengan mayoritas berada di dalam kategori terakhir. (Amnesty International, *East Timor: Violations of Human Rights*, 1985, hal.65-66).

mengenai Pemandahan Internal (UN Guiding Principles on Internal Displacement) menyatakan bahwa setiap orang berhak dilindungi dari pemindahan sewenang-wenang dari kediamannya, termasuk dalam situasi konflik bersenjata.²⁶² Dalam hal penduduk memang mengalami pemindahan, pihak berwenang harus menjamin kesejahteraannya termasuk akses mereka kepada makanan, air, tempat tinggal, serta pelayanan medis.²⁶³

Pasal 49 Konvensi Jenewa melarang kekuatan pendudukan untuk melakukan pemindahan atau deportasi paksa secara individual ataupun massal terhadap penduduk.²⁶⁴ Penahanan terhadap penduduk sipil dapat berlangsung di bawah syarat-syarat khusus. Pasal 78 Konvensi Jenewa IV menyatakan bahwa keputusan-keputusan mengenai penahanan harus dibuat sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, yang mencakup hak naik banding untuk semua pihak yang terlibat, dan hak telaahan ulang berkala terhadap kasusnya..

Penahanan di Ataúro pada 1980

295. Para mantan tahanan di Ataúro menceritakan kepada Komisi bahwa pemindahan paksa ke Ataúro terjadi secara bergelombang.²⁶⁵ Gelombang pertama berlangsung pada 10 Juli dan 3 September 1980, membawa mereka yang diduga terlibat dalam serangan gerilya di stasiun radio dan televisi Marabia dan barak-barak Batalion 744 di Becora (Dili) pada 10 Juni 1980. Bernardino Villanova menceritakan pengalamannya kepada Komisi dalam Audiensi Publik tentang Penahanan Politik:

Pada tanggal 10 Juni 1980 saya ambil bagian dalam serangan ke Marabia. Saya adalah penghubung Falintil di wilayah Lorosae. Pertama kami menyerang Gedung Negara Lahane, lalu kami lanjutkan ke menara televisi Marabia. Tujuan serangan ini menunjukkan bahwa Fretilin masih ada. Pada tanggal 11 Juni saya dibawa ke Kodim. Saya lalu disuruh pulang tetapi kemudian dipanggil lagi. Saya bersembunyi di gereja. Tetapi di gereja ada anggota intel. Sehingga saya dibawa lagi pada tanggal 12 Juni. [Peningkat penahanan dan penyiksaannya di Mes Korem, Kartika Sari (markas SGI di Colmera, dan Comarca Balide)]

Pada tanggal 3 September 1980 saya dimasukkan ke dalam mobil hitam pada tengah malam dan dibawa ke Tacitolu. Saya tidak tahu ke mana saya dibawa. Dari Tacitolu kapal angkatan laut membawa kami ke Ataúro. Kelompok yang pertama termasuk Komandan Nahak dan keluarganya. Di kelompok kedua ada saya dan 13 orang yang

.....
* Casimiro Soriano da Silva memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai penahanan dan pemindahan paksa terhadap keluarganya dan orang-orang lain (total 9 orang), setelah anak laki-lakinya dilibatkan dalam peristiwa Marabia pada 1980. [Pernyataan HRVD 01498].

lain termasuk Custódio, Tarzizu, Alfredo, Geraldo, Vicente Simoes, Domingos Santos dari Becora, Bernadino dari Lacoto. Di kelompok ketiga ada José Soares Guterres dan Maria Fatima. Tidak banyak yang ada di kelompok kedua. Kami disuruh tinggal di dekat Koramil.

Di Ataúro saya bebas bergerak. Saya hanya tidak ada kontak dengan keluarga saya. Kami menerima jagung yang sangat lapuk. Tiap keluarga menerima bagian sama, tanpa mempertimbangkan besarnya keluarga. Penduduk Ataúro membagi lahan mereka dengan kami, meskipun mereka juga lapar. Kami... menolong mereka dengan bekerja di ladang mereka dan menerima bagian dari panen. Penduduk juga memberi kami lahan untuk diolah. Saya dan ke-13 orang lain yang terlibat kasus Marabia juga dipaksa bekerja di ladang-ladang di Beloi yang tidak subur. Di sana tentara-tentara bersenjata terus mengawasi kami. Pada tahun 1983 saya dinyatakan “bebas” tetapi masih ada tali yang sangat panjang yang mengikat saya. Saya memutuskan untuk tinggal di Ataúro saja.²⁶⁶

Penahanan di Ataúro pada 1981

296. Pada 1981 satu gelombang pengiriman massal terjadi lagi, sebagian besar adalah orang dari distrik-distrik timur yakni Baucau, Viqueque, dan Lautém. Sebagian besar orang ini dikirim pada Agustus-November 1981. Dengan demikian ini terjadi sebagian bertepatan dengan berlangsungnya Operasi Kikis, operasi ‘pagar betis’ di mana 60.000 orang Timor dikerahkan untuk mengepung basis-basis Falintil. (Lihat Bagian 3: Sejarah konflik.) Pengiriman penduduk ke Ataúro tampaknya merupakan bagian dari strategi keseluruhan untuk menghancurkan Resistansi dengan melenyapkan pasukan perjuangannya melalui Operasi Kikis dan menghilangkan basis dukungannya dengan mengirim mereka ke pengasingan di Ataúro.

297. Komisi telah mendengar kesaksian bahwa dari 15 desa di Subdistrik Quelicai (Baucau) saja, kurang lebih 300 keluarga dipindahkan ke Ataúro.²⁶⁷ Seseorang dari kelompok ini adalah Joana Pereira. Setelah kehilangan orangtuanya akibat kelaparan dan penyakit pada 1978, Joana Pereira dipindahkan secara paksa ke Ataúro dari desanya yaitu Laculio (Quelicai, Baucau). Ia menceritakan kepada Komisi keadaan yang dialami olehnya dan saudara laki-lakinya, sebagai yatim piatu yang dibawa ke pulau itu:

Pada tanggal 29 Agustus 1981, Koramil Quelicai mengatakan kepada kami “Siapa yang masih memiliki keluarga di hutan harus mendapatkan hukuman.” Pihak Koramil kemudian mendaftarkan nama-nama orang. Setelah beberapa hari saya melihat nama-nama yang dipasang pada sebuah tripleks di depan Kantor Desa, baru saya mengetahui kalau kami akan dihukum di Ataúro. Saat itu saya berumur 13 tahun, Mateus Pereira masih kecil berumur sekitar sembilan tahun. Kami

berdua dihukum di Ataúro karena kakak kami Pascoal Pereira (Nixon) masih di hutan. Pada tanggal 30 Agustus 1981, Komandan Koramil Quelicai membawa kami dengan pengawalan empat truk bersenjata menuju pelabuhan Laga, Baucau. Di sana, kami tinggal selama sehari. Kemudian pada tanggal 31 Agustus, pagi sekitar pukul 7 pagi tentara Indonesia membawa kami, juga beberapa keluarga lain dari Desa Seiçal, Buibau, Quelicai, dan Laga menuju Dili dengan Kapal Perang 502...

Setibanya di Dili ... tentara memerintahkan untuk mengambil makanan yang kami bawa lalu dimasukkan dalam ember. Kemudian Mateus mengambil makanan tersebut untuk kami berdua. Kami makan agar dapat bertahan (karena selama dua hari dalam perjalanan menuju Dili kami tidak makan) Pada tanggal 1 September 1981, kami diberangkatkan ke Ataúro dengan kapal perang 511. Berangkat dari Dili pada pukul 8 pagi dan sampai di Ataúro pada pukul 12 siang. Pada waktu kami turun dari atas kapal, Koramil Ataúro dan orang-orang yang lebih dulu dihukum di sana yang menerima kami. ... Koramil Ataúro menyuruh kami berbaris, kemudian mendaftarkan nama kami satu per satu hingga selesai, setelah itu mereka memanggil mobil untuk membawa kami menuju tempat hukuman (penjara). Sampai di sana, saya dan adik saya tinggal secara terpisah, dia tinggal di rumah dengan nomor 22 bersama 60 orang, saya tinggal di rumah nomor 24 dengan 70 orang. Kami tinggal dalam sebuah rumah yang tidak ada apa-apanya, atap rumah ditutup dengan seng, dindingnya ditutup dengan terpal, tidak ada tempat tidur. Waktu kami memulai hidup di Ataúro, pada awalnya kami tidak diberi makanan oleh tentara. Saya dan Mateus hanya makan makanan yang kami bawa dari Quelicai. Satu bulan kemudian kami baru mendapatkan jatah makanan berupa jagung sebanyak tiga kaleng (ukuran kaleng sarden) dari tentara. Jatah makanan tersebut kami terima dua minggu sekali per kepala keluarga (KK).

Kondisi demikian menyebabkan terjadinya kelaparan. Orang yang paling banyak meninggal adalah mereka yang dari Lospalos dan Viqueque. Dalam sehari yang meninggal 2-5 orang, yang paling banyak adalah anak-anak dan orang tua.²⁶⁸

298. Hermenegildo da Cruz adalah seorang anggota DPRD tingkat II di Viqueque dan liurai Ossu. Ia menggambarkan pada Komisi tentang upacara pada 1981 untuk mengirim 700 keluarga ke Ataúro dari desa-desa di Subdistrik Viqueque, Ossu, Uatolari, Uato Carbau, dan Lacluta (semua Viqueque), dan Barique (Manatuto). Orang-orang yang akan dipindahkan tersebut dikumpulkan di sebuah lapangan sepak bola untuk upacara tersebut, yang dihadiri oleh komandan Korem, ketua DPRD provinsi tingkat I, Bupati Viqueque, Sekwilda, komandan Kodim, dan pejabat-pejabat militer dan sipil lainnya. Danrem menjelaskan pada Hermenegildo da Cruz bahwa meskipun 700 keluarga akan dipindahkan ke Ataúro, hanya sekitar 32 keluarga yang memiliki hubungan kuat dengan Fretilin/Falintil. Hermenegildo ingat bahwa Camat

Lacluta ketika itu, Antonio Vicente Marques Soares, mengintervensi saat upacara dan berhasil mencegah penduduk Lacluta dipindahkan ke Ataúro. Dia menceritakan kepada Komisi tentang keadaan menyedihkan dari mereka yang ditahan di Ataúro:

Banyak orang-orang dari Viqueque meninggal di Ataúro karena kelaparan, penyakit, dan perubahan cuaca. Orang-orang tua dan anak-anak meninggal setiap hari, sampai akhirnya ICRC dapat memberi bantuan pada tahun 1982. Pada tahun 1985 dan 1986 orang-orang mulai kembali ke Viqueque, meskipun banyak yang memilih untuk tinggal di tempat lain.²⁶⁹

Pemberontakan Kablaki

299. Setelah pemberontakan pada 20 Agustus 1982 di daerah Kablaki, lebih daripada 600 orang dari Mau Chiga, Dare, Nunumoge, Mulo, dan Hato Builico (di Ainaro) dan Rotutu (di Manufahi) dibawa ke Ataúro.

300. Abilio dos Santos, dari Mau Chiga, ditahan oleh militer Indonesia pada 10 Juli 1982 setelah ia menghadiri pertemuan rahasia untuk merencanakan pemberontakan tersebut. Meskipun ia ditangkap bersama 15 orang lainnya, pemberontakan tetap terjadi. Sebagai pembalasan, pasukan Indonesia menghancurkan Mau Chiga, membakar semua rumah, persediaan makanan, dan membunuh semua ternak. Seluruh Desa Mau Chiga dievakuasi. Sebagian orang terbunuh di Builico, yang lainnya ditahan di Dare, Dotik, Ainaro, dan Ataúro. (Lihat Bagian 6: Profil pelanggaran hak asasi manusia; Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan; Bab 7.7: Pemerksaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual.)

301. Abilio dos Santos adalah salah satu orang yang dibawa ke Ataúro. Ia dan 14 dari 15 orang yang tertangkap pada Juli dibawa ke penjara Balide di Dili pada 29 Agustus 1982 oleh militer Indonesia. (Anggota lain dari grup itu, Ernesto, telah ditembak mati tak lama setelah penangkapan mereka.²⁷⁰) Dua hari kemudian, pada pukul 03.00, mereka dibawa ke pelabuhan Dili. Di sana mereka diberi tahu:

Negara tidak sedang menghukum kamu. Negara harus mengevakuasi kamu karena wilayah kamu tidak aman. Jika rakyat Dare dan Mau Chiga tetap tinggal di desa mereka, dan ada seorang prajurit Indonesia atau Hansip yang terbunuh, kamu akan dibunuh. Itu sebabnya kami sekarang membawa kamu ke Ataúro.²⁷¹

302. Komisi telah menerima daftar berisi 373 nama orang dari Mau Chiga yang dipindah secara paksa ke Pulau Ataúro pada 1982, termasuk 73 orang yang meninggal di pulau tersebut antara 1982 dan 1987.*

* Submisi kepada CAVR, Daftar korban dari Mau Chiga. Rakyat Mau Chiga juga dipaksa pindah ke Dare (Hato Builico, Ainaro), Dotik (Manufahi).

Kondisi di Ataúro

303. Orang-orang ditahan di pulau tandus tersebut di barak-barak darurat dalam kondisi yang berdesak-desakan dan tidak higienis. Placido Lisboa dipaksa pindah dari Viqueque ke Ataúro pada 15 November 1981. Ia menggambarkan kondisi hidup saat itu:

Waktu itu terdapat 2 daerah permukiman. Satu barak besarnya 12 x 6 meter; 1 barak untuk 1 RT [Rukun Tetangga] yaitu 80 sampai 90 KK [Kepala Keluarga]. 1 barak dengan 6 kamar, 1 kamar sekitar 6 KK. Totalnya ada 45 barak; dari gereja sampai ke SMP ada 32 barak; dan dari Mercado ke ujung jalan ada 13 barak. Kami ditangkap untuk "diamankan", supaya tidak mendukung orang di atas.²⁷²

304. Hanya ada sedikit makanan atau air bersih, dan para tahanan yang kelaparan dipaksa bertahan hidup dengan umbi-umbian dan buah-buahan liar yang mereka bisa kumpulkan di sekitar kamp atau meminta-minta atau mencuri dari warga masyarakat setempat. Mereka juga mengumpulkan ikan-ikan kecil dan kerang-kerang di pantai pada saat air surut. Menurut para saksi, pejabat Indonesia membagi-bagikan jagung kepada setiap keluarga, tapi jumlah dan kualitasnya tidak mencukupi untuk bertahan hidup.²⁷³ Menurut Adelino Soares, yang kemudian menjadi koordinator kesehatan lokal program bantuan ICRC, antara 300 dan 350 orang meninggal di tahun-tahun awal mereka di Ataúro, sebelum kedatangan bantuan dari ICRC pada 1982.²⁷⁴ Hal ini dikonfirmasi oleh Faustino Gomes de Sousa, penduduk asli Ataúro dan saat ini menjabat kepala Desa Vila (Ataúro, Dili), yang pada waktu kecil menyaksikan situasi orang-orang yang dideportasi tersebut:

Saya ingat melihat 5 atau 6 anak yang mati setiap hari karena diare. Dulu mereka dikubur di belakang [barak] dan ada batu nisan, tetapi banjir dan longsor tahun 1998 menghancurkan kuburan-kuburannya.²⁷⁴

305. Maria do Ceu Lopes da Silva Federer, seorang penduduk asli Pulau Ataúro yang kemudian bergabung dengan ICRC untuk memberi bantuan kepada para tahanan, menceritakan mengenai kondisi hidup di barak-barak, di mana setiap ruangan berisi lima sampai sepuluh keluarga. Wabah penyakit kolera menyebabkan kematian puluhan anak dan orang dewasa. Dia bercerita kepada Komisi:

Anak-anak meninggal seperti semut, seperti lalat. Para ibu memanggil nama anak-anak mereka yang mati sepanjang malam. Beberapa ibu ingin bunuh diri, hilang ingatan, payudara mereka penuh dengan susu.²⁷⁵

* Wawancara CAVR dengan Adelino Soares, Villa, Ataúro, (Dili), 7 Maret 2002. Bukti-bukti yang menguatkan diterima dari Rui de Araújo, yang menyebutkan 319 kematian di Ataúro dalam Wawancara CAVR dengan Rui de Araújo, Maumeta, Ataúro, Dili, 27 Oktober 2003.

306. Luis da Costa Soares adalah tukang kayu dan anggota gerakan klandestin yang beroperasi di daerah Tutuluro (Same dan Ainaro). Pada 1982, setelah pemberontakan 20 Agustus di Mau Chiga, ia ditahan dan kemudian dibawa ke Ataúro. Pindahannya dari Manufahi ditangani oleh Kodim di Same dan Korem di Dili. Ia memberitahu Komisi:

Keadaan di pulau Ataúro sangat memprihatinkan terutama penduduk yang datang dari wilayah timur seperti Distrik Baucau, Viqueque, dan Lospalos, [serta yang dari] Dili, Aileu, Ainaro, dan Manatuto. Banyak yang meninggal dunia, terutama anak-anak dan orang lanjut usia. Rata-rata setiap hari lima atau enam jiwa meninggal dunia. Penderitaan dialami oleh hampir semua penduduk yang dipindahkan paksa ke Pulau Ataúro, yang mengalami masa-masa sulit antara lain: kelaparan, depresi mental, kekurangan gizi, keadaan trauma... Keadaan ini berlangsung selama hampir satu tahun lebih. Setelah ada bantuan kemanusiaan dari Palang Merah Internasional/ICRC kematian penduduk akibat kekurangan makanan dan obat-obatan semakin berkurang.²⁷⁶

Tahanan-tahanan sipil

307. Sebagian besar orang yang dibawa ke Ataúro bukanlah tahanan-tahanan politik, juga bukan pejuang resistansi bersenjata. Umumnya orang-orang yang mendapati dirinya berada di Ataúro adalah warga desa biasa dari daerah-daerah tempat Fretilin/Falintil dianggap aktif. “Memisahkan ikan dari air” adalah ungkapan yang sering digunakan oleh otoritas militer Indonesia untuk menjelaskan strategi pemindahan massal para penduduk.²⁷⁷ Tabel berikut memperlihatkan beberapa kesaksian yang diberikan pada Komisi oleh orang-orang yang selamat dari kamp penahanan di Pulau Ataúro:

Tabel 12: Pilihan kesaksian dari mereka yang selamat dari Ataúro

| Sumber | Nama dan tempat | Uraian |
|------------|-------------------------------------|---|
| HRVD 00047 | Seorang laki-laki Timor-Leste, Dili | Pada Juni 1980, setelah insiden Marabia, deponen ditangkap oleh prajurit-prajurit Batalion 744, bersama dua perempuan. Mereka dibawa ke Ataúro dan ditempatkan di bawah kontrol komandan Koramil, Suryana. Kedua perempuan tersebut mengalami pelanggaran seksual oleh prajurit-prajurit di Koramil. Deponen menyebut 5.000 orang tahanan di Ataúro. Banyak yang meninggal karena kelaparan dan kekurangan obat-obatan. |

| | | |
|------------|---|--|
| HRVD 05668 | Paulo Soares, Viqueque, Viqueque | Paulo Soares, dengan empat orang lainnya (Builou, Gamalu'u, Lorenço Soares, dan Lorenço) ditangkap oleh Kasi 1 Kodim Viqueque dan dibawa ke Ataúro. Mereka mengalami kelaparan setiap hari di Ataúro, dengan hanya makan sagu dan jagung dari gereja. Tidak terdapat cukup makanan untuk semua orang yang dibawa ke Ataúro. Lorenço meninggal akibat kelaparan dan kekurangan obat-obatan. |
| HRVD 06489 | Maria Soares, Aiili, Manututo, Manatuto | Maria Soares dan sepupunya, Juliana Soares, ditangkap oleh Hansip di rumah mereka di Malarahun. Mereka ditahan di Kodim Manatuto selama dua malam kemudian dibawa ke pelabuhan Dili. Hari berikutnya mereka dibawa ke Ataúro, tempat mereka tinggal selama empat tahun. Alasannya adalah karena ketiga anaknya tetap tinggal di hutan bersama pasukan Falintil. Dia mengalami kekurangan makanan saat berada di Ataúro. |
| HRVD 04801 | Evalina de Jesus, Daisua, Same, Manufahi | Karena anaknya yang bernama Alexandrino Buti Bere tidak ikut menyerah bersama dia dan keluarganya, Evalina dan suaminya, Cesar Doutel Sarmento, dan anggota keluarganya yang lain dibawa ke Ataúro. Pihak militer menduga dia dan keluarganya telah memberi makanan bagi Falintil. Mereka ditahan di Ataúro selama empat tahun. |
| HRVD 07503 | Olinda Cabral Matahoi, Uatolari, Viqueque | Berdasarkan perintah dari <i>liurai</i> setempat, F56, Olinda diberitahu untuk menyiapkan keluarganya untuk dipindah ke Ataúro. Dia, orangtuanya (José Sarmento dan Lourença), dan anggota keluarga lainnya melakukan perjalanan ke Viqueque untuk melapor pada sang <i>liurai</i> . Mereka dipindah paksa ke Ataúro. Di sana kedua orangtuanya meninggal karena sakit. Dia berada di Ataúro selama lima tahun sebelum dia dikembalikan ke desanya di Uatolari . |
| HRVD 08717 | Sebastiana Soares, Aiteas, Manatuto, Manatuto | Karena suaminya seorang prajurit Falintil di hutan, Sebastiana Soares dibawa dari desanya di Hirileun ke Kodim Manatuto. Dia dipindahkan ke Ataúro dan tinggal di sana selama tiga tahun. Dia dibebaskan pada 1984. |
| HRVD 00039 | RL Viqueque, Viqueque | Pada 28 Agustus 1983 RL, bersama 98 orang lainnya, dipindah paksa ke Ataúro oleh anggota-anggota Kodim Viqueque. Saat tiba di Ataúro, mereka diinterogasi oleh anggota-anggota Kopassandha, diperintahkan berjalan menggunakan lutut di tanah yang disebar kedelai dan kotoran sapi. Mereka diikat dan disetrum dengan listrik. Domingos Boek dibawa keluar dan menghilang. Di tempat asalnya, istrinya mengalami pelanggaran-pelanggaran seksual oleh seorang prajurit Indonesia. |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| HRVD 00076 | Seorang lelaki dari Timor, Lahane, Dili | Setelah ditahan selama satu tahun di penjara Balide, 46 orang dibawa ke Ataúro pada 5 September 1981. Mereka menerima satu kaleng jagung per minggu. Malequias dan banyak orang lainnya meninggal di sana karena kekurangan makanan. Terjadi perbaikan kondisi setelah kedatangan ICRC pada 1982. Orang-orang dari kelompok ini yang selamat dibebaskan pada 1984 untuk kembali ke rumah. |
| Profil Komunitas CAVR ²⁷⁸ | Vemassee, Baucau | Empat puluh orang dari Subdistrik Vemassee dipindahkan ke Ataúro karena mereka dicurigai telah menjadi pendukung Fretilin |
| Profil Komunitas CAVR ²⁷⁹ | Eraulo, Samalete, Railaco, Ermera | Orang-orang dari <i>aldeia</i> Eraulo dipindah paksa oleh ABRI ke Ataúro pada 1992 karena mereka dikatakan memiliki anggota keluarga di hutan. Setelah dua bulan di Ataúro, tiga orang meninggal akibat kelaparan. |

Meninggalkan Ataúro – tetapi tidak selalu kembali ke rumah

308. Program bantuan kemanusiaan ICRC yang dimulai pada 1982 meringankan sebagian besar penderitaan. Saksi-saksi menyebut pengurangan pelan jumlah angka kematian berkat distribusi bantuan dan penyediaan perawatan medis yang reguler. Kondisi membaik sehingga otoritas Indonesia memperbolehkan para pengamat internasional mengunjungi pulau tersebut pada 1982, termasuk wartawan-wartawan dari Portugal dan mantan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam.

309. Menurut pernyataan-pernyataan yang diterima Komisi, pada 1983 militer Indonesia mulai mengembalikan orang-orang dalam jumlah besar dari Ataúro, setelah adanya tekanan dari ICRC. Sama seperti ketika mereka pada awalnya dideportasi ke pulau tersebut, mereka dikembalikan dalam kelompok-kelompok. Kelompok pertama yang dikembalikan adalah dari Baucau. Setahun kemudian, pada 1984, para tahanan dari Lautém diperbolehkan pulang. Orang-orang dari Viqueque dikembalikan antara 1986 dan 1987. Sisanya dikembalikan pada 1987, kecuali 17 keluarga yang memilih tetap tinggal di Ataúro.²⁸⁰

310. Penderitaan orang-orang yang pernah ditahan di Ataúro tidak berakhir dengan pembebasan mereka. Banyak dari mereka mengalami diskriminasi dan kesulitan setelah kembali. SL adalah seorang ibu tunggal yang suaminya adalah prajurit Falintil di gunung. Selama di penahanan tapi sebelum dikirim ke Ataúro, ia diperkosa. Ia dan kedua anak lelakinya, waktu itu berumur empat dan enam tahun, berhasil selamat dari penderitaan di Ataúro, dan dengan bantuan ICRC, dibawa pulang ke Same. SL bercerita kepada Komisi:

Suami dan empat dari anak-anak saya lari ke hutan. Saya tetap tinggal dengan anak-anak saya yang lain. Pada 1981, selama Operasi Kikis di Aitana, saya ditahan di pos ABRI selama tujuh bulan, bersama tiga perempuan lain. Seorang komandan militer Indonesia memerkosa

saya dan teman komandan itu memerkosa adik ipar saya, meskipun saat itu ia sedang hamil. Mereka memerkosa saya selama tujuh bulan... Kami dipindahkan ke Kodim Same, lalu anak-anak saya dan saya dipindahkan ke Ataúro... Kami ditahan di Ataúro selama empat tahun, tujuh bulan, dan tujuh hari ... di Ataúro sangat parah, tidak ada makanan. Dengan bantuan ICRC, kami kembali ke Same. Tetapi penduduk di sana tidak menerima. Mereka memanggil kami batar fuhuk (jagung lapuk). Mereka bilang kami Fretilin dan mereka tidak akan memberi kami makanan...²⁸¹

311. Ermelinda Nogueira dibebaskan dari Ataúro bersama keluarganya pada 1982. Ia dikirim ke Ataúro karena memiliki keluarga yang berjuang di hutan. Ia kembali ke rumahnya di Maluro (Lore I, Maluro, Lautém). Tidak lama setelah pembebasannya ia terjebak dalam reaksi sesudah *levantamentos* Agustus 1983. Karena ia masih memiliki saudara-saudara di hutan, ia dibawa ke pos ABRI di Maluro bersama empat orang anaknya, di mana ia diinterogasi dan disiksa selama dua hari, termasuk disetrum dengan listrik, digantung dengan kepala di bawah, dan dipukuli oleh komandan pos. Tidak lama setelah itu dua orang anggota keluarganya yang lain ditangkap dan dihilangkan. Sembilan bulan kemudian suaminya, Carolino, ditangkap dan disiksa oleh Babinsa lokal dengan dipukuli dengan popor senapan di muka, kepala, dan dadanya. Carolino terluka sangat parah akibat perlakuan ini sehingga ketika Babinsa memanggilnya kembali, ia tidak dapat pergi. Ketika Ermelinda Nogueira pergi menggantikannya, Babinsa mengancam akan membunuh Ermelinda sebelum melepaskannya.²⁸²

312. Yang lain kembali dari Ataúro hanya untuk mendapati bahwa selama mereka ditahan di Ataúro, saudara-saudaranya yang berjuang bersama Falintil telah dibunuh atau dihilangkan.²⁸³

313. Kemudian ada juga orang-orang yang dibawa kembali dari Ataúro hanya untuk dipindahkan ke kamp penahanan lain. Lokasi-lokasi tersebut termasuk Bonuk (Ainaro), Cailaco (Bobonaro), dan Dare (Ainaro).

314. Di antara kamp-kamp baru ini, kamp yang terletak di Kale di Desa Purogua (Cailaco, Ermera) digunakan untuk periode yang paling lama.²⁸⁴ Misalnya, João Bosco dari Bucoli (Baucau, Baucau) ditahan oleh anggota-anggota Kopassandha pada 1982. Ia diinterogasi di Hotel Flamboyan di Kota Baucau selama tiga hari, kemudian dipindahkan ke sebuah lokasi di Fatumaca, lalu kembali lagi ke Hotel Flamboyan. Ia kemudian dibawa menggunakan pesawat militer ke Dili dan ditahan di markas Batalion 744. Setelah sembilan hari, ia dibawa ke Ataúro, tempat ia tinggal selama tiga tahun. Pada 1985, ia “dibebaskan” tapi dibawa ke Cailaco (Bobonaro). Setelah tiga tahun lagi ia dikembalikan ke desanya dengan bantuan ICRC.²⁸⁵

315. Felijarda Florinda Pereira, Domingos da Silva, Natercia da Silva, dan Dircia Fatima Corsila juga direlokasikan ke Cailaco (Bobonaro) setelah penahanan mereka di Ataúro. Mereka tinggal di Cailaco selama tiga tahun lagi dan akhirnya kembali ke desa mereka di Ossoala (Vemasse, Baucau) pada 1986. Mereka tidak pernah lagi melihat ayah atau suami mereka.²⁸⁶

Pelanggaran seksual dan kelaparan di Bonuk (Ainaro)

316. Bagi orang-orang yang dibawa ke Bonuk dari Ataúro situasi menjadi lebih buruk lagi. SL (dari Hato Builico, Ainaro) dipindah paksa ke Ataúro pada 1982 setelah suaminya lari kembali ke gunung. Ia berada di sana selama dua tahun dan dua bulan, di mana anaknya yang tertua meninggal karena kurangnya perawatan medis. Dari Ataúro ia dibawa ke Bonuk. Ia diintimidasi oleh prajurit-prajurit dari Koramil setempat dan diperkosa oleh seorang Hansip. Ia hamil dan melahirkan seorang anak akibat pelanggaran-pelanggaran seksual yang dialaminya.²⁸⁷

317. Mario de Araújo memberi bukti kepada Komisi tentang penahanannya di Ataúro antara 1982 dan 1985 dan pemindahannya belakangan ke Bonuk. Selama dua bulan ia ditahan di Bonuk ia melihat delapan orang yang meninggal karena kelaparan dan malaria.²⁸⁸

318. Abilio dos Santos memberitahu Komisi bagaimana saat ia dan sekitar 30 orang lainnya dikembalikan dari Bonuk menggunakan truk, mereka diperintahkan turun di daerah yang disebut Mau-ulo III, dekat Builico di Kota Ainaro. Terdapat beberapa rumah sementara yang sudah dipersiapkan oleh pihak militer, dikelilingi oleh pos-pos jaga Hansip. Mereka tinggal di sana selama satu setengah bulan, tanpa menerima bantuan apapun kecuali beberapa sumbangan dari pastor lokal.²⁸⁹

319. Orang-orang Mau Chiga yang ditahan di Ataúro tidak dikembalikan ke desa asalnya, tapi dipaksa tinggal di kota kecamatan Dare (Hato Builico, Ainaro), di mana sudah ada ratusan orang terpindahkan akibat pemberontakan 20 Agustus 1982. Arus penduduk yang tiba-tiba datang ke Dare kembali mengakibatkan krisis dalam persediaan makanan. Mereka akhirnya diperbolehkan kembali ke rumah tiga tahun setelah relokasi paksa ke Dare tersebut.

Pemindahan, kekerasan, dan kelaparan di Dare

Berikut adalah kesaksian Amelia de Jesus kepada Komisi tentang pengalamannya selama tiga tahun saat dia dan banyak orang lainnya dari Mau Chiga dipindah secara paksa ke Dare setelah serangan Falintil pada 20 Agustus 1982.

Pada tanggal 20 Agustus 1982, pada saat gerilyawan masuk ke Mau Chiga kami membantu dengan memberikan mereka makan. Waktu militer Indonesia kemudian masuk ke desa kami, mereka membakar semua rumah. Saya dan keluarga saya pergi sembunyi di 'fatukoak' semacam gua, dengan sekitar 29 orang, termasuk anak-anak, perempuan, dan laki-laki. Kami tinggal di sana selama kurang-lebih satu minggu. Waktu itu, anak saya yang bernama Bernadino Tilman, seorang guru, ditembak mati pada saat dia turun mencari makanan.

Sekitar empat hari kemudian, Hansip dan militer Indonesia menemukan kami di tempat kami sembunyi. Mereka membawa gasolina dan rumput untuk membakar. Mereka bertanya, "Siapa suruh kalian sembunyi di sini? Orang hutan? Apakah Falintil sembunyikan senjata di sini?" Akhirnya saya meninggalkan tempat persembunyian... Mereka menyuruh kami meninggalkan semua barang-barang kami serta makanan. Selama perjalanan kami dilecehkan dengan kata-kata kasar.

Kami dibawa ke SD di Dare dan di sana kami ditahan. Waktu kami sampai di sana, nama-nama kami didaftar dan dimasukkan ke Koramil. Kepala Koramil waktu itu dipanggil Pak Rusu. Selama di SD kami diperlakukan kasar sekali. Saya berada di sana bersama dua anak saya, Angelita Da Silva (satu-setengah tahun) dan Alexito Araújo (sembilan bulan), dan suami saya, Alarico Tilman. Satu saat, pada akhir Agustus, seorang Hansip F40 menusuk suami saya sampai keluar darah. Waktu itu Hansip yang bernama Paulo (orang Mau Chiga) yang memang masih saudara mengatakan "Jangan sakiti Oom saya." Paulo mengatakan bahwa untuk "kasih dingin mereka" sebaiknya beri mereka sesuatu. Maka suami saya memberikan surik (pedang tradisional) dan tais kepada tentara untuk menyelamatkan keluarga.

Satu malam, datang orang-orang ke kamar di mana kami tinggal di sekolah. Mereka memerintahkan saya keluar untuk diminta informasi. Waktu itu suami saya mengatakan "Kamu keluar saja, agar kamu tidak boleh mati." Saya sadar bahwa maksud mereka ada untuk perkosa saya. Yang datang tentara Indonesia, mereka memakai tutup kepala dan hanya tampak mata saja. Mereka berteriak "Keluar, keluar." Saya mengatakan, "Tidak, bagaimana suami saya!" Waktu itu saya pegang terus tangan suami saya dan saya tidak lepas. Mereka menjambak saya dan memukul saya, tetapi saya tidak melepaskan suami saya. Mereka pukul kepala dan punggung saya. Saya berteriak, "Biar kita mati berdua, tetapi tinggalkan anak-anak saya." Akhirnya, mereka menyerah dan meninggalkan kami... Kami tinggal di sekolah hanya beberapa minggu. Pada saat itu, kami diharuskan mencari makan sendiri. Pada pagi hari, kami disuruh cari makanan... Mereka ikut sambil memegang senjata.

Pada saat itu kami mati karena dua hal: mati karena lapar, dan mati karena interogasi malam-malam. Malam hari di SD kami tidak boleh keluar, dan harus buang air di dalam kaleng. Baru pagi-pagi kami bersihkan. Kami tidur di lantai semen yang penuh darah. Darahnya adalah darah orang-orang yang sudah lebih dulu ditahan di sana. Banyak sekali orang yang dibunuh, ada yang dibakar, dan ada yang dibuang ke dalam sungai. Ada ratusan orang dari desa-desa sekitar. Setiap malam, mereka ambil perempuan dan

memerkosa mereka. Katanya “minta informasi” tetapi sebenarnya diperkosa. Ini dilakukan pada anak perempuan dan ibu-ibu. Mereka dipanggil dan diperkosa di dalam hutan sekitar SD... Sejak itu kami tinggal di rumah ayah saya di Dare. Setiap malam, para Hansip dan masyarakat diharuskan ronda, termasuk suami saya. Beberapa tahun kemudian, sekitar tiga tahun, waktu itu kami masih tinggal di Dare, orang-orang sudah dipulangkan dari Dotik dan Ataúro, sehingga terjadi lagi kelaparan di Dare. Waktu itu kita tidak bebas berkebun, dan harus punya surat jalan kalau mau ke Ainaro, Suai, atau Maubessi. Setiap kali kami berkebun, mereka [tentara Indonesia] ikut sambil memegang senjata. Kami lapar terus, karena tidak ada tanah yang cukup untuk jumlah penduduk yang begitu padat. Kami hidup seperti ini selama tiga tahun.

Alternatif selain penahanan di Ataúro: Raifusa dan Dotik

320. Selain dibawa ke tempat-tempat penahanan di Dare, Ainaro, dan Aileu serta dikirim ke Ataúro, para penghuni desa di sekitar Mau Chiga juga dikirim ke Raifusa (Betano, Same, Manufahi) dan Dotik (Alas, Manufahi) setelah pemberontakan 20 Agustus. Dalam sebagian kasus, setelah mereka dibebaskan dari Ataúro, para tahanan tidak kembali ke tempat asal mereka, tapi justru bergabung dengan orang-orang yang sudah lebih dulu berada di Dotik dan Raifusa.

Dotik (Manufahi)

321. Setelah insiden 20 Agustus ratusan penduduk desa melarikan diri ke Gunung Kablaki untuk menghindari serangan balasan. Mereka kemudian dikumpulkan dan ditahan di Kodim dan Koramil Same. Dari situ mereka kemudian dibawa ke Dotik, desa di selatan Alas di pesisir selatan Manufahi.

322. Laurinda dos Santos memberitahu Komisi bagaimana, ketika mereka mendengar tentang serangan Falintil, dia dan 95 orang penduduk desa lain melarikan diri ke Gunung Kablaki. Mereka dikejar oleh pasukan Indonesia yang menembak mati salah satu dari mereka, Domingos Lobato, dan menangkap sisanya. Mereka ditahan di Same selama satu minggu, sebelum dipindahkan ke Dotik.²⁹⁰

323. UL bergabung dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu berada di Dotik. Ia berhasil menghindari penangkapan selama tiga bulan, hidup bersama 30 keluarga lainnya di gunung. Mereka ditangkap dan dibawa ke Koramil Rotutu, kemudian dipindahkan ke Kodim di Same, di mana mereka diinterogasi. Ia memberitahu Komisi bahwa ia dibawa dalam sebuah konvoi sepuluh truk militer ke Dotik. Ketika mereka tiba di sana, tidak ada tempat berlindung bagi mereka. Mereka terpaksa tinggal di rumah-rumah yang telah dibangun oleh para tahanan, atau membangunnya sendiri. UL menuturkan kepada Komisi bagaimana ia dan dua

perempuan muda lain dalam keluarganya sering diperkosa oleh prajurit-prajurit selama tiga tahun keberadaannya di Dotik.²⁹¹

324. Setelah ditangkap pada sekitar November 1982 dan ditahan selama satu bulan di Kodim Same, João de Araújo berkumpul kembali dengan istri dan anak-anaknya di Dotik. Ia menggambarkan kondisi hidup di sana:

*Kami ditinggalkan begitu saja di sana tanpa diberitahu di mana kami harus tinggal. Kepala desa memberi kami tanah di mana kami bangun rumah. Kami kira-kira 100 orang, tetapi begitu banyak yang mati selama waktu ini karena kekurangan makanan dan obat-obatan. Kami sakit karena gigitan nyamuk. Mula-mula kami tidak punya makanan untuk dimakan. Untungnya beberapa keluarga yang sudah tinggal di sana memberi kami ubi dan sagu sehingga kami dapat bertahan hidup selama beberapa bulan. Setelah beberapa bulan ABRI datang dan memberi kami peralatan pertanian sehingga kami dapat bercocok tanam.*²⁹²

325. João de Araújo tinggal di Dotik selama tiga tahun. Mário Viegas Carrascalão, gubernur provinsi ketika itu, mengunjungi penduduk di Dotik pada 1984 dan berjanji membebaskan mereka. João de Araújo memberitahu Komisi bahwa gubernur mengirim makanan kepada mereka tapi pihak tentara menukar beras dengan jagung. Pada 1985 mereka dibawa ke Koramil Dare di mana mereka tinggal selama dua tahun lagi, sebelum diperbolehkan kembali ke rumah mereka di Mau Chiga.

326. Ketika berada di Dotik, Januario de Araújo dan yang lainnya disuruh pergi mencari seorang komandan Falintil dan prajurit-prajuritnya, dan diberi tahu bahwa jika mereka tidak berhasil, keluarga mereka akan dibunuh:

Waktu masuk Rotutu, mereka ambil parang-parang kami dan itu tidak dikembalikan kepada kami sampai kami diturunkan di tempat kosong di Dotik. Kami diberi kesempatan dua minggu harus selesaikan membangun rumah. Kalau tidak kami akan dibunuh semua. Kami diberikan hanya dua karung jagung. Karung warna hitam mempunyai cap USAID. Pasukan yang menjaga di sana dari Same. Setelah dua minggu rumah masyarakat dan pos-pos telah dibangun. 43 laki-laki dipilih untuk kembali ke Same. Di sana mereka masuk sel selama empat malam, habis diberikan tugas untuk mencari orang di hutan. Kalau mereka berhasil menangkap Komandan Sarmiento dan Pires, maka masyarakat di Dotik akan hidup. Kalau tidak, masyarakat akan mati. Mereka dua minggu di Kablaki, tapi tak dapat Komandan.

.....
* Wawancara CAVR dengan Januario de Araújo, Mau Chiga, Ainaro, 4 Juni 2003; Pernyataan HRVD 07200 [José Rosa de Araújo] membenarkan adanya praktik perekrutan warga sipil secara paksa dalam operasi-operasi untuk mencari Falintil. Dia memberikan bukti tentang pembunuhan dua warga sipil oleh TNI selama operasi tersebut.

327. Belakangan orang-orang asal Ainaro, yang telah dibebaskan dari Atauro, dibawa ke Dotik selama beberapa bulan sebelum dipindahkan ke Dare. Candida Pinto memberi tahu Komisi bahwa kelompok yang kembali dari Atauro bersamanya dikirim ke Lafukar di Dotik (Alas, Manufahi) oleh Kodim Ainaro, yang menolak membiarkan mereka kembali ke Mau Chiga. “[Lafukar] benar-benar kosong. Tujuhbelas orang meninggal akibat kekurangan makanan selama tiga bulan mereka di sana.”²⁹³

Raifusa (Betano, Same, Manufahi)

328. Komisi diberitahu bahwa banyak orang-orang Rotutu (Same, Manufahi) dipindah paksa ke Raifusa. Ini terjadi sebagai balasan terhadap serangan oleh Hansip setempat dan Falintil pada 20 Agustus 1982, hari yang sama dengan serangan di Mau Chiga terhadap kantor Babinsa dan Bimpolda desa, saat sejumlah senjata telah dirampas.²⁹⁴ Orang-orang dari Mau Chiga juga dibawa ke Raifusa. Sebagian besar orang yang dipindah ke Raifusa dari Rotutu dan Mau Chiga dibawa ke sana segera setelah pemberontakan 20 Agustus, setelah singgah sebentar di Kodim Same. Beberapa orang dibawa ke Raifusa setelah bertahun-tahun ditahan di Pulau Atauro. Seperti di Dotik, kondisi di Raifusa sangat berat. Komisi menerima pernyataan dari orang-orang yang selamat tentang penderitaan mereka dan kematian orang-orang lain selama penahanan mereka di Raifusa.

329. Seorang lelaki dari Timor memberitahu Komisi bagaimana keluarganya dipindah paksa ke Raifusa setelah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia termasuk pemerkosaan terhadap istrinya oleh Hansip dan Babinsa, dan pemukulan sekelompok pemuda. Menurut seorang lain:

*Ada keputusan oleh ABRI bahwa semua orang Rotutu akan dipindahkan ke Raifusa untuk mempermudah pihak yang berwenang untuk mengendalikan penduduk dan mencegah mereka melakukan kontak dengan Fretilin. Kami kelaparan di lokasi baru tersebut. Dua anggota keluarga saya, Paulo da Silva dan Francelina dos Santos, meninggal akibat kekurangan makanan dan obat-obatan.*²⁹⁵

330. Setelah insiden di Rotutu, Domingos Melo, seorang Hansip yang tidak ikut serta dalam serangan tersebut, ditangkap dan dibawa ke Kodim Same, di mana ia ditahan selama tiga bulan. Saat di sana ia dipukuli dengan tongkat dan lututnya ditusuk dengan pisau. Setelah dibebaskan, ia mendapati bahwa semua penduduk Rotutu telah dipindahkan ke Raifusa. Ia bergabung dengan mereka tapi mendapati bahwa kondisi hidup di Raifusa sangat sulit. Warga Rotutu adalah penduduk gunung dan tidak biasa dengan dataran rendah pesisir. Salah satu korban lingkungan yang tidak bersahabat itu adalah istri Domingos Melo, Constantina Soares, yang meninggal di sana karena penyakit.²⁹⁶

331. Kerentanan orang-orang yang dipindahkan ke Raifusa tampak dari sejumlah kesaksian.

332. Armando Borsa juga memberi tahu Komisi bagaimana dia dan tujuh orang lainnya ditahan, satu minggu setelah dipindah paksa ke Raifusa dari desa mereka di Rotutu. Mereka dipukuli dan diinterogasi di Kodim Same, dan akhirnya dibebaskan sebelas hari kemudian, tapi hanya setelah memberikan perhiasan tradisional (*belak*) dan seekor ayam pada para penangkapnya.²⁹⁷

333. Pada 1982 ICRC mulai menyediakan bantuan di Dotik dan Raifusa. Saturnino Tilman dipekerjakan sebagai pekerja kesehatan dalam program pencegahan malaria. Ia ingat bahwa meskipun ICRC sudah memulai pekerjaan bantuan kemanusiaannya di Raifusa, tingkat kematian masih tetap tinggi. Orang-orang meninggal karena tuberkulosis, malaria, marasmus (beri-beri), diare, dan kolera.²⁹⁸

334. Joaquim da Silva dan istrinya, Alexandrina, ditangkap oleh Hansip di rumah mereka di Rotutu. Mereka dibawa ke Kodim Same, tempat keduanya diinterogasi. Joaquim da Silva dibebaskan, tapi istri dan anak-anaknya dikirim ke Ataúro selama lima tahun. Di Ataúro, anak perempuan mereka yang bernama Frentelina da Silva meninggal. Alexandrina kemudian dipindahkan ke Raifusa bersama dua anaknya yang tersisa. Kedua anaknya meninggal di Raifusa karena kekurangan makanan.²⁹⁹

335. Kemudian orang-orang yang dipindahkan ke Raifusa diizinkan kembali ke desa asal mereka pada 1986. Sejumlah keluarga memilih untuk melanjutkan hidup di lokasi transmigrasi lokal yang didukung pemerintah, yang disebut SP1, SP2, SP3, di Colacau, Besusu, dan Dotik.³⁰⁰ Selama penelitian yang dilakukan Komisi di Raifusa, saksi-saksi menunjukkan pada staf Komisi sebuah perkuburan dengan sekitar 800 batu makam yang mereka yakini adalah tempat dikuburnya orang-orang yang meninggal dari Rotutu dan Mau Chiga.³⁰¹

Lalarek Mutin (Viqueque)

336. Di Kraras (Viqueque) pada 8 Agustus 1983, 14 orang prajurit Indonesia dari batalion zeni tempur, Zipur 9, terbunuh dalam sebuah pemberontakan Ratih, pasukan pertahanan sipil desa. Insiden ini memicu reaksi militer yang berlangsung lama di seluruh distrik Viqueque yang melibatkan penahanan dan eksekusi massal yang luas (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Penduduk Kraras yang selamat, yang sebagian besar adalah perempuan, dipindahkan ke lokasi baru yang disebut Lalarek Mutin.

337. Penduduk Kraras sebelumnya telah mengalami pemindahan paksa dan konsekuensi-konsekuensi buruknya. Mereka sebenarnya berasal dari Desa Bibileo, yang pada 1970, pada saat sensus Portugis yang terakhir, memiliki populasi sebesar 3.000 jiwa. Penduduk Bibileo lari ke pergunungan pada 1977 ketika pasukan Indonesia masuk ke daerah mereka. Mereka menyerah di Kota Viqueque pada 1979, dan berada di sebuah daerah kota bernama Beloi. Menurut José Gomes, kebebasan bergerak yang dibatasi dan kurangnya penyediaan kebutuhan dasar menyebabkan satu sampai dua orang meninggal setiap hari di Beloi.³⁰² Pada 1980 mereka berencana pindah kembali ke Bibileo, tapi pada menit terakhir dipindahkan

ke sebuah lokasi baru yang disebut Kraras. Kraras cukup lebih subur dibanding Bibileo, dan masyarakatnya pada awalnya bersemangat untuk melanjutkan kembali aktivitas pertanian mereka.

338. Dalam kesaksiannya, José Gomes menggambarkan latar belakang serangan Ratih pada 8 Agustus 1983. Pembunuhan tujuh penduduk sipil oleh prajurit-prajurit dari Batalion Zipur 4, termasuk selama masa gencatan senjata antara Falintil dan pasukan Indonesia, serta kasus-kasus pelanggaran seksual dan pelecehan yang terus terjadi telah meningkatkan ketegangan di desa sampai tahap hal ini meledak dalam kekerasan pada 8 Agustus. Setelah pembunuhan-pembunuhan tersebut, penduduk Kraras melarikan diri ke Desa Luca, dan Buicaren, ke Kota Viqueque dan ke gunung, menyadari bahwa pembalasan akan sangat keras.³⁰³ Komisi telah menerima bukti tentang serangkaian pembantaian dan eksekusi massal yang menyusul kemudian, termasuk pembantaian pada 17 September 1983 di daerah Tahubein di Desa Buicaren, di mana sebanyak 181 orang dipercaya telah dibunuh (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

Pendirian Lalerek Mutin

339. Orang-orang yang selamat dari Desa Kraras dikumpulkan dari Buicaren, Luca, dan Viqueque Kota serta pindah ke Lalerek Mutin (Luca), satu daerah yang sebelumnya tidak berpenghuni karena iklimnya yang sangat panas, kering, dan tanahnya yang tidak subur. Saat kedatangannya pada September 1983, mereka dibawa ke barak-barak darurat yang dibangun oleh pihak militer. Rita Amaral da Costa bercerita kepada Komisi:

Waktu itu tidak ada kantor atau satu rumah pun tidak ada. Itu daerah kosong, hutan-hutan liar...Selama di sana makanan sangat sulit. Tempat bernaung tidak ada. Alat pertanian kami—pacul, parang, dsb.—diambil semua oleh ABRI. Kami hanya dapat pakai satu parang yang tua dan sudah rusak, yang tertinggal di sana. Kami pakai itu untuk potong semak dan rumput tinggi untuk membersihkan tempat baru, kami buat semacam rumah kebun kecil untuk tinggal sementara. Untuk tempat tidur kami potong kayu dan menyusun itu di atas tanah, kemudian di atas kayu itu kami letakkan potongan-potongan bambu yang telah dibelah dan tidur di atas itu. Setiap hari kami mencari kelapa yang sudah tua dan telah jatuh untuk dimakan, kelapa itu kami membelah dengan alat bekas dan mengolahnya untuk dijadikan tepung dan bisa kasih makan anak-anak kami.

Kami dibiarkan selama dua bulan (tidak dikontrol oleh pihak keamanan manapun). Setelah itu baru ada seorang anggota Nanggala ... datang dari Buicaren untuk bertugas lagi di Lalerek Mutin. Saat itulah mulai menekan dan memaksa masyarakat untuk bekerja dalam pembangunan Desa Lalerek Mutin. Kami dipaksa kerja mulai potong kayu, angkut kayu, membangun rumah, kerja kebun, dan pekerjaan lainnya. Siangnya kami bekerja di dalam pembangunan desa

*sedangkan malamnya kami melakukan ronda malam atau penjagaan di sekitar desa. Baik itu laki-laki maupun perempuan dan laki-laki yang sudah tua dan perempuan yang mempunyai bayi. Mereka melakukan penjagaan pada siang hari saja.*³⁰⁴

340. Para penghuni baru Lalerek Mutin sebagian besar adalah perempuan, anak-anak, dan orang-orang tua. Para lelaki yang mampu, jika tidak terbunuh, terpaksa melarikan diri ke gunung, atau menghilang.³ Para perempuan Lalerek Mutin menceritakan tentang masa-masa sulit yang mereka hadapi selama tahun-tahun pertama hidup mereka di Lalerek Mutin. Mereka dipaksa melakukan “pekerjaan lelaki”—seperti menanam, membangun gedung-gedung umum, dan ikut serta dalam operasi-operasi keamanan. Setidaknya empat orang perempuan menjadi korban kekerasan seksual. (Lihat Bab 7.7: Pemerksaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual.)

Kondisi ekstrem

341. Para penduduk Lalerek Mutin hidup dalam kondisi-kondisi kekurangan yang parah dan diawasi dengan ketat: tidak ada akses terhadap sumber air bersih; kontrol keamanan yang ketat atas semua gerakan; apel wajib pada pagi dan siang hari; komunikasi terbatas dengan siapapun dari desa-desa tetangga; tidak ada perawatan medis; dan seseorang yang ingin bepergian lebih daripada 200 meter dari pusat desa harus mendapatkan izin. Yang paling parah adalah kurangnya makanan. Penduduk Kraras datang tanpa makanan, tidak mendapatkan sedikitpun dari pihak militer, dan tidak diberikan alat-alat pertanian.

342. Domingos Rangel sedang berada di sekolah di Viqueque ketika insiden Kraras terjadi. Ia dan sembilan anggota keluarganya lari ke pergunungan, karena takut akan pembalasan pihak militer. Setelah tiga bulan di Gunung Bibileo, ia dan keluarganya menyerah di Lacluta (Viqueque), tempat ia menyaksikan pamannya disiksa saat interogasi. Satu hari kemudian mereka diangkut dengan truk tentara ke Lalerek Mutin. Hidup di Lalerek Mutin sangat sulit. Domingos memberitahu Komisi, “Saya ingat empat atau lima orang meninggal setiap hari. Kami hanya membungkus mereka dalam tikar dan mengubur mereka.”³⁰⁵

Penghancuran makanan secara paksa

343. Salah satu tahanan operasi dipaksa untuk berpartisipasi dalam ‘curlog’, singkatan Indonesia untuk penghancuran logistik atau penghancuran semua

.....
* Olinda Pinto Martins memberikan bukti kepada Komisi bahwa 17 orang laki-laki yang dinaikkan ke sebuah truk, dengan alasan mengambil makanan dari Kraras, tidak pernah terlihat lagi. Dalam Audiensi Publik tentang Perempuan dan Konflik, CAVR, Dili (28-29 April 2003), Beatriz Miranda Guterres berbicara mengenai suaminya yang direkrut sebagai seorang TBO dan tidak pernah kembali. Bukti-bukti yang menguatkan ada dalam Pernyataan HRVD 00155. Lihat juga wawancara CAVR dengan Honorio Soares de Gonzaga, Lalerek Mutin, Viqueque, 30 Mei 2003

sumber makanan. Operasi curlog diatur oleh Chandrasa 7 Grup 2, sebuah unit Kopassandha (Pasukan Khusus). Prajurit-prajurit dan Hansip ikut bersama orang-orang itu sekali atau dua kali dalam seminggu. Sebelum keluar, semua orang diharuskan berkumpul dan dihitung. Tidak seorangpun diperbolehkan berjalan sendiri. Di manapun mereka menemukan kelapa, pisang, pepaya, cempedak, dan nangka atau buah pohon lainnya, mereka mengambil semua buahnya dan harus menebang pohon tersebut. Tujuannya adalah agar Falintil tidak mendapat akses pada sumber-sumber makanan. Ketika mereka kembali ke desa, semua orang harus berkumpul dan dihitung lagi. Beberapa orang tidak berkeberatan melakukan ini karena hal ini adalah kesempatan bagi mereka untuk pergi keluar dan menemukan makanan. Tapi, ini juga berarti bahwa pohon-pohon buah dihancurkan tidak akan ada pohon lagi untuk masa depan.

344. Pada 1984 José Gomes, sebagai kepala desa Lalerek Mutin, diminta oleh pihak militer untuk melakukan sensus penduduk desa. Ia menghitung sekitar 1.300 orang, jauh lebih sedikit dibanding 3.000 orang yang hidup di Bibileo pada 1970. Ia percaya bahwa lebih daripada 1.000 orang meninggal antara kejadian-kejadian di Kraras dan sensus tersebut. Operasi curlog baru berhenti pada Desember 1985 ketika unit Chandrasa kembali ke Jawa. Pada saat yang sama kehidupan di Lalerek Mutin mulai membaik karena rakyat bisa kembali melanjutkan aktivitas pertanian mereka seperti biasa.³⁰⁶

345. Lalerek Mutin tetap tertutup dari bantuan pihak luar dan tidak pernah menerima bantuan dari ICRC ataupun CRS. Desa ini lebih dikenal dengan sebutan 'desa janda'. Akses ke Lalerek Mutin tetap sulit bahkan pada 1990-an.

Pemberontakan-pemberontakan di Lautém

346. Antara 5 dan 8 Agustus 1983 ratusan anggota kelompok pertahanan sipil, termasuk Wanra, Hansip, dan para lelaki mampu lainnya dari Desa Mehara (Tutuala, Lautém), Lore dan Leuro (Lospalos, Lautém), dan Serelau (Moro, Lautém), melarikan diri dari desa-desa mereka untuk bergabung dengan pasukan Falintil di pergunungan. Banyak dari para anggota bersenjata kelompok-kelompok pertahanan sipil ini membawa senjata mereka ke dalam hutan. Desa-desa asal para lelaki itu dihukum sangat berat oleh tentara Indonesia.³⁰⁷ Sebagai tanggapan atas pembelotan massal itu, para prajurit Indonesia mengumpulkan para perempuan dan lainnya yang tertinggal. Penduduk Kota Tutuala mengingat apa yang terjadi:

Pada tanggal 9 Agustus 1983, masyarakat dari Kampung Loikeru serta dari Kampung Porlamanu dipindahkan secara paksa dari rumah mereka oleh tentara Indonesia dari Sater 515 dan 641 dan Komando Grup 1,2, dan 4 yang dipimpin oleh Letnan Dua Toto, Batalion Linud 100, ke tempat konsentrasi yakni di Gedung Sekolah Dasar dan gereja Desa Mehara. Ini dilaksanakan untuk menambah kontrol oleh ABRI setelah kejadian Mehara. Dua orang meninggal dunia akibat kelaparan.³⁰⁸

347. Seorang perempuan dari Timor memberitahu Komisi bagaimana dia dan penduduk Mehara dinaikkan ke dua truk militer dan dibawa ke Tutuala tempat mereka diinterogasi tentang kontak-kontak mereka dengan Falintil.³⁰⁹ Satu perempuan Timor lain, yang suaminya adalah salah satu dari orang-orang yang lari ke pergunungan, mengingat bagaimana dia dan ratusan perempuan dipaksa mengumpulkan semua harta benda mereka, termasuk makanan dan ternak, untuk direlokasi ke pusat desa di Mehara. Mereka dipaksa tinggal di sana selama dua bulan.³¹⁰

348. VL memberitahu Komisi tentang kekerasan seksual yang dilakukan terhadapnya oleh prajurit-prajurit Indonesia dari Linud 100, sekitar dua bulan setelah relokasi tersebut:

Maka setelah dua bulan para tentara dari kesatuan Linud 100 memerintahkan semua perempuan yang suaminya lari ke hutan agar berkumpul ... Setelah semua perempuan berkumpul mereka berkata, "Semua boleh kembali ke rumah masing-masing kecuali VL dan WL, mereka tetap di sini supaya mereka diperiksa dulu." Lalu kami dibawa ke pos. Kami tiba di pos pada jam 6 malam. ... Setelah itu mereka mulai memukul kami, menelanjangi kami dari jam 6 malam sampai jam 1 pagi. Mereka memukul pakai kayu balok, menendang, menelanjangi kami, mengancam kami dengan senjata, menyuruh kami untuk mengaku. Tetapi kami tidak mengakui apa-apa karena kami memang tidak tahu apa-apa. Malam itu perwira Intel Kasi I mencabut bulu kelamin saya satu persatu supaya saya merasa kesakitan, dan kalau saya tidak tahan dengan sakit saya akan mengaku apa saja yang saya ketahui. Tetapi memang karena saya tidak tahu apa-apa saya tetap diam saja, melihat itu mereka semakin marah dan memukul saya sampai hidung, dan mulut saya keluar darah. Sampai pada pukul 1 pagi mereka berhenti menyiksa saya...³¹¹

349. Setelah insiden pada Agustus, ratusan orang dari Distrik Lautém dipindahkan ke Pulau Ataúro. Keluarga dari sedikitnya tiga desa di Iliomar, di mana sebuah pemberontakan terencana dapat dicegah akibat perpecahan di antara Hansip lokal, dipindah paksa ke Ataúro. Gaspar Seixas, seorang pemimpin masyarakat dari Desa Iliomar (Iliomar, Lautém) memberitahu Komisi bahwa sekitar 300 keluarga telah dikumpulkan dan dipindahkan ke Ataúro dari Desa Iliomar I dan II. Fernando Amaral dari Desa Fuat (Iliomar, Lautém) mengingat bahwa 300 keluarga dibawa ke Ataúro akibat pemberontakan pada Agustus.³¹²

Pemindahan sebelum dan sesudah Jajak Pendapat 1999

350. Jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto pada Mei 1998 mendatangkan perubahan besar di Indonesia dan Timor-Leste. Tuntutan untuk kebebasan politik dan demokrasi yang lebih luas di Indonesia, yang dikenal sebagai Reformasi, dilakukan juga di Timor oleh CNRT yang baru terbentuk, oleh para mahasiswa dan pemuda, dan oleh masyarakat Timor umumnya. Bagi rakyat Timor-Leste, Reformasi membuka cakrawala baru. Ketika pemerintahan Habibie mulai mendefinisikan posisi baru Indonesia terhadap Timor-Leste dengan menawarkan status khusus bagi wilayah tersebut, harapan-harapan ini menjadi semakin kuat. Demonstrasi terbuka dan debat publik membuat otoritas Indonesia terdesak.

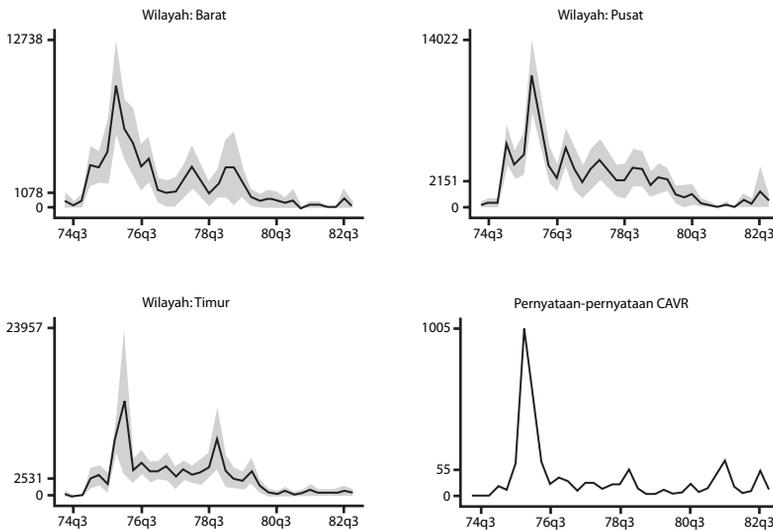
351. Tanggapan penguasa Indonesia yang paling mengkhawatirkan terhadap gerakan kemerdekaan yang semakin percaya diri ini adalah dibentuknya kelompok-kelompok milisi, mulai akhir 1998. Kelompok-kelompok ini, yang seolah-olah merupakan reaksi spontan dari pihak prointegrasi terhadap momentum yang semakin kuat bagi kemerdekaan, sebenarnya merupakan puncak dari militerisasi Indonesia atas masyarakat Timor-Leste (lihat Bagian 4: Rezim pendudukan). Pada awal 1999, tak lama setelah Presiden Habibie mengumumkan bahwa rakyat Timor-Leste dapat memilih antara melanjutkan integrasi dengan Indonesia atau kemerdekaan, kelompok-kelompok milisi bersenjata lengkap dibentuk di setiap distrik dan mulai meneror masyarakat. Menyebarluasnya senjata-senjata rakitan dan senjata modern di tangan kelompok-kelompok milisi yang baru terbentuk, menggerakkan gelombang kekerasan yang dimulai pada akhir 1998, memuncak pada April 1999, surut antara bulan Mei dan Agustus menjelang Jajak Pendapat yang diawasi oleh PBB, dan memuncak kembali dalam kecamuk kekerasan dan kehancuran menyusul pengumuman bahwa rakyat Timor-Leste telah memilih kemerdekaan.

352. Kekerasan kelompok milisi, sering bekerja secara terbuka dengan disponsori TNI, menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala yang tidak pernah terjadi sejak akhir 1970-an. Penahanan, penyiksaan dan perlakuan buruk, pembunuhan, kekerasan seksual, dan perekrutan paksa, semua mencapai puncak baru pada 1999, begitu juga pemindahan. Selama 1999, pemindahan terjadi karena penduduk kabur secara spontan dari kekerasan dan intimidasi milisi, dan sebagai gerakan masyarakat terorganisasi dari rumah mereka dan tempat-tempat mereka mengungsi mencari keamanan. Seperti di tahun-tahun awal, pemindahan di segala variasi keadaan yang terjadi pada 1999 memiliki dampak besar pada kemampuan rakyat untuk mencari makan, khususnya karena otoritas Indonesia melakukan usaha terpadu untuk menolak bantuan kemanusiaan bagi mereka.

353. Sejak mobilisasi kelompok-kelompok milisi pertama pada akhir 1998, kekerasan dan intimidasi oleh milisi menyebabkan banyak orang melarikan diri dari rumah mereka. Pada bulan-bulan awal 1999 serangan milisi terhadap penduduk prokemerdekaan di desa-desa dan upaya perekrutan paksa milisi di kalangan rakyat yang umumnya enggan sudah mulai menyebabkan pemindahan internal ribuan

penduduk Timor, yang mengungsi di tempat-tempat yang mereka kira aman di gereja-gereja, perkotaan Dili, basis-basis Falintil, dan daerah-daerah perunungan dan hutan yang terpencil. Pada April, ketika negosiasi-negosiasi prakarsa PBB antara Portugal dan Indonesia memasuki tahap akhir dan pawai-pawai dan pelantikan marak terjadi untuk mengukuhkan struktur milisi, kekerasan milisi dan pemindahan yang diakibatkannya memuncak. Dalam bulan-bulan kampanye menjelang pemungutan suara pada 30 Agustus, terjadi penurunan jumlah orang yang mengungsi dari rumahnya. Tapi, jeda kekerasan dan pemindahan ini ternyata hanya relatif: intimidasi milisi dan TNI terus berlanjut selama kampanye tersebut, dan meskipun banyak orang yang mengungsi tersebut kembali ke daerah asalnya untuk mendaftar menjadi pemilih, mereka sering tidak kembali ke rumah mereka sebenarnya tapi ke tempat-tempat yang mereka harap dapat memberi perlindungan, seperti gereja di Suai. Ledakan kekerasan yang terjadi setelah pemungutan suara menyebabkan perpindahan mayoritas penduduk Timor-Leste, baik melalui deportasi terorganisasi sekitar 250.000 penduduk Timor-Leste ke Timor Barat, ataupun pengungsian internal sebagian besar orang yang tertinggal. Kedua jenis pemindahan ini sekali lagi diikuti dengan merebaknya berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang lain, termasuk penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan, kekerasan seksual, dan pembunuhan, dalam skala besar-besaran.

Perkiraan kejadian pemindahan di Timor-Leste pada 1999



Sumber: Survei Kemataain retrospektif (Modul Pemindahan), CAVR

Gejolak awal (November 1998-Maret 1999)

354. Pada Juni 1998 Presiden Habibie yang baru diangkat mengeluarkan gagasan 'otonomi khusus' bagi Timor-Leste. Bertekad untuk menemukan solusi yang dapat diterima secara internasional bagi masalah Timor-Leste, pemerintahan Habibie memulai pembicaraan tiga arah tentang usulan ini bersama PBB dan Portugal pada Agustus 1998. Inisiatif ini mengakibatkan imbas yang besar di lapangan di Timor-Leste.

| | |
|-------------------|---|
| 27 Januari 1999 | Pemerintah Habibie mengumumkan bahwa rakyat Timor-Leste akan secara langsung menentukan apakah mereka akan menerima atau menolak Otonomi Khusus |
| 11 Maret 1999 | Portugal dan Indonesia mencapai kesepakatan bahwa rakyat Timor-Leste akan menjalankan haknya atas penentuan nasib sendiri melalui pemungutan suara langsung |
| 5 Mei 1999 | Kesepakatan tiga arah antara Indonesia, Portugal, dan PBB memberikan tanggung jawab kepada PBB untuk menjalankan Jajak Pendapat tersebut |
| 1 Juni 1999 | UNAMET tiba di Dili |
| 16 Juli 1999 | Pendaftaran pemilih dimulai |
| 5 Agustus 1999 | Pendaftaran pemilih berakhir, 451.792 calon pemilih telah terdaftar |
| 14 Agustus 1999 | Kampanye dimulai |
| 30 Agustus 1999 | Hari pemungutan suara; 98,6% dari pemilih terdaftar memberikan suaranya |
| 4 September 1999 | Hasil Jajak Pendapat diumumkan, 21,5% memilih otonomi dalam Indonesia, 78,5% menolaknya. |
| 12 September 1999 | Indonesia menyetujui pembentukan pasukan multinasional (Interfet) untuk memulihkan ketertiban wilayah tersebut |
| 20 September 1999 | Interfet tiba di Timor-Leste |

355. Pada 9 November 1998 pasukan Falintil menyerang Koramil di Alas (Manufahi). Serangan tersebut mengakibatkan tewasnya sedikitnya tiga prajurit Indonesia dan sembilan prajurit Falintil dan pendukungnya.³¹³ (Lebih jauh tentang insiden Alas lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, dan Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan.) TNI melancarkan operasi militer besar-besaran untuk membalas, dengan menyerang rakyat sipil dan

membakar rumah orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan di desa-desa sekitarnya, yakni di Taitudak, Aituha (Alas, Manufahi), Manumera, dan Lesu Ata (Turisca, Manufahi).

356. Kepala desa Taitudak (Alas, Manufahi), Vicente Xavier, dan pemuda-pemuda desa tersebut lari ke hutan. Beberapa hari kemudian mereka ditemukan oleh prajurit-prajurit dari Yonif 744 dan Vicente ditembak mati. Kemudian, para prajurit TNI menjarah rumah-rumah rakyat, mengambil persediaan makanan mereka dan ternaknya.³¹⁴ Alcina Fernandes, istri Vicente Xavier, menuturkan pada Komisi bagaimana dia bersama yang lain mencari perlindungan di gereja:

*Pada bulan November 1998 saya mendengar suara tembakan. Saya [menggendong] bayi saya lari ke rumah. Tapi suami saya, Vicente Xavier, telah lari lebih dulu. Saya lari ke gereja dengan bayi saya, sementara rumah saya dibakar dan semua harta benda dijarah dan dicuri. Semua ternak kami, seperti kuda, sapi, dan babi semua dibunuh. Setelah kejadian ini saya mencari tempat berlindung di gedung sekolah. Sementara saya tinggal di sekolah, istri dari para prajurit yang ditugaskan datang dan maki-maki saya setiap hari. [Suatu hari] makanan yang sedang saya masak di kompor dijatuhkan oleh mereka.*³¹⁵

357. Salah satu pernyataan mengatakan bahwa camat memindahkan orang-orang dari gereja tersebut ke sekolah setempat. Mereka baru diperbolehkan kembali ke rumah mereka pada 20 Desember 1998, lebih daripada sebulan setelah insiden tersebut.³¹⁶ Seorang saksimata yang masih menjadi pengungsi di Timor Barat ketika Komisi mengambil pernyataannya, menceritakan pembakaran dan penjarahan tersebut:

*Pada tanggal 12 November 1998, anggota-anggota Timor-Leste dari Koramil Alas, F1 dan F2, dan anak buahnya membakar rumah-rumah penduduk sipil di Kampung Lurin, Kulutetuk, Hasbot, dan Kampung Natarwen. Akibat dari pembakaran tersebut sejumlah barang-barang tradisional dan harta benda penduduk terbakar menjadi abu. Para pelaku juga menjarah properti penduduk. Saya menyaksikan pembakaran rumah yang pertama. Semua penduduk diberitahu untuk meninggalkan rumah dan dusun kecil tersebut.*³¹⁷

358. Karena serangan-serangan balasan ini, sebagian orang lari ke hutan.³¹⁸ Yang lain mencari aman di Dili, tempat mereka relatif bisa membaur tanpa diketahui identitasnya. Luis Godinho Manuel da Costa, misalnya, memberitahu Komisi bahwa setelah sebelumnya mengungsi di rumah seorang pastor paroki setempat di Desa Liurai (Turisca, Manufahi), dia menemukan kuburan dangkal tempat seorang pemuda lokal dikuburkan, kemudian melarikan diri ke Dili sampai setelah Jajak Pendapat.³¹⁹

359. Pada awal Januari 1999 orang-orang dari distrik-distrik lain juga terpaksa lari dari kekerasan dan acaman. Komisi menerima laporan tentang berbagai insiden

kekerasan, yang mengakibatkan larinya para penduduk sipil pada Januari 1999. Sebagian orang tetap terusir sepanjang periode kekerasan terkait Jajak Pendapat.³²⁰ Sebagian besar laporan awal mengenai kekerasan dan pemindahan yang diterima Komisi datang dari Distrik Liquiça.

Liquiça

360. Di Liquiça, milisi Besi Merah Putih (BMP) yang baru dibentuk sudah aktif pada awal Januari 1999. Perekrutan paksa ke dalam milisi, khususnya di Subdistrik Maubara, tempat markas BMP, adalah salah satu faktor yang menyebabkan pemindahan. Seorang pria dari Timor-Leste diculik oleh lima orang anggota milisi BMP pada Januari 1999 di Maubara (Liquiça). Dia ditampar, dipukuli, dan dipaksa untuk “menjaga” pos BMP selama sembilan bulan berikutnya. Setelah Jajak Pendapat dia dideportasi paksa ke Atambua. Dia berada di Timor Barat selama satu tahun sebelum kembali ke rumahnya.³²¹ Yang lain lari dari rumah untuk menghindari perekrutan paksa ke dalam milisi.³²²

361. Komisi memiliki pernyataan-pernyataan mengenai serangan BMP di Maubara pada 19 Januari 1999, yang menyebabkan banyak orang melarikan diri ke desa-desa di pergunungan seperti Leotela (Liquiça).³²³

362. Pada umumnya, orang-orang yang berpindah pada bulan-bulan awal ini, tidak kembali ke rumahnya sampai tibanya pasukan Interfet di Timor-Leste pada akhir September 1999. Misalnya, pada 16 Februari 1999, seorang komandan milisi BMP, F3, berasal dari Timor-Leste, bersama dengan 35 orang anggota milisi, menangkap Alarico Manuel dan keluarganya di Vatuboro (Maubara, Liquiça). Mereka ditahan dan dianiaya di puskesmas setempat, kemudian dipindah ke perumahan departemen pertanian di Cuico (Maubara, Liquiça). Milisi BMP menyerang Cuico empat hari kemudian, pada 23 Februari 1999. Alarico lari ke Dili dan berlindung di rumah Manuel Carrascalão di Lecidere. Lebih daripada 100 pengungsi berada di rumah tersebut ketika milisi Aitarak dan BMP menyerang pada 17 April 1999.³²⁴ Alarico ditahan di beberapa tempat, kali ini oleh polisi Indonesia. Dia dibebaskan oleh Interfet di Dili pada akhir September.³²⁵

Kematian karena kekurangan di Liquiça

363. Meskipun dampak kemanusiaan dari pemindahan pada 1999 kecil dibandingkan dengan pemindahan dan kelaparan pada akhir 1970-an, Komisi menerima laporan-laporan kematian karena deprivasi terkait dengan pemindahan-pemindahan tersebut. Augusta da Costa Freitas sedang hamil ketika milisi BMP menyerang desanya di Vatuvou (Maubara, Liquiça). Dia, suaminya, Domingos, dan anak-anak mereka lari ke Faulara di Leotela (Liquiça). Setelah dua minggu di sana, suaminya terjangkit malaria. Lemah dan terkuras secara fisik, dengan makanan yang tidak cukup dan tanpa akses ke obat-obatan, Domingos meninggal pada 29 Februari 1999. Tak lama kemudian, Augusta melahirkan anaknya. Namun bayi tersebut meninggal pada usia dua minggu empat hari.³²⁶

364. Cerita yang sama tragisnya disampaikan oleh Miguel dos Santos. Pada 15 Februari 1999, ketika milisi BMP mulai menyerang Desa Vatuvou dan Cuico (Maubara, Liquiça), sejumlah besar orang mengungsi ke gunung dan lokasi-lokasi lain. Miguel lari menghindari kekerasan tersebut bersama istri dan bayinya yang baru lahir. Mereka bersembunyi di daerah Bikolo di dekat Sungai Kaisavo selama 30 hari. Hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, bayi berumur lima minggu tersebut akhirnya meninggal. Setelah mengubur anak mereka, Miguel dan istrinya lari ke Sare, Asulau (Hatolia, Ermera) yang berbatasan dengan Subdistrik Maubara. Di sana sudah ada ribuan orang yang berpindah. Keluarga tersebut tinggal di sana sampai kedatangan Interfet pada akhir September 1999.³²⁷

365. Marcelino Utasulu memberitahu Komisi bagaimana dia dan istrinya, Magdalena Marçal, lari ke Asulau ketika istrinya sedang hamil tiga bulan. Magdalena meninggal saat melahirkan pada 3 Juni 1999. Bayi yang baru lahir tersebut tidak dapat bertahan tanpa ibunya; dia meninggal enam hari setelah kelahirannya.³²⁸

366. Kondisi keamanan terus memburuk di Distrik Liquiça, yang memuncak dengan pembantaian pada 6 April 1999 terhadap orang-orang yang berlindung di gereja Liquiça (lihat paragraf 379 dan 459). Komisi menerima lebih banyak laporan mengenai tindakan kekerasan oleh milisi Besi Merah Putih terhadap orang-orang yang dicurigai prokemerdekaan di distrik tersebut, yang memaksa ribuan orang lari ke gunung dan melintasi perbatasan ke Timor Barat, bahkan sebelum April 1999.³²⁹

Viqueque

367. Dua distrik lain yang melaporkan kekerasan dan pemindahan sebelum April 1999 adalah Viqueque dan Covalima. Pada periode ini jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan yang mengakibatkan pemindahan di Viqueque hanya dilampaui oleh jumlah yang dilaporkan dari Liquiça. Insiden paling awal dilaporkan oleh Domingos Gomes. Insiden tersebut terjadi pada 4 Januari 1999 ketika prajurit-prajurit dari Kodim Viqueque dan milisi Tim Makikit mulai melepaskan tembakan ke udara. Tembak-menembak tersebut berlanjut selama beberapa jam, membuat orang-orang di sekitarnya lari ke hutan. Penembakan tersebut tidak berhenti sampai seorang Babinsa dan pastor paroki lokal Padre Francisco turun tangan.³³⁰

368. Komisi juga mendengar kesaksian tentang serangan-serangan terkoordinasi oleh milisi Tim Makikit dan Naga Merah di sejumlah lokasi di Dilor (Lacluta, Viqueque) pada 20 Maret 1999:

Pada 20 Maret, setelah berkumpul di pos TNI di Dilor, di Subdistrik Lacluta, milisi-milisi yang baru direkrut menyerang orang-orang di desa-desa sekeliling, menganiaya dan mengancam para pendukung kemerdekaan. Sekitar 160 orang ditahan dalam waktu singkat di Koramil di Dilor oleh TNI dan milisi [Tim] Makikit, dan diperkirakan sekitar 500 orang dari wilayah tersebut melarikan diri dari rumahnya dalam ketakutan.³³¹

369. Komisi telah menerima laporan yang mengatakan bahwa 11 anggota milisi menganiaya seorang pria Timor-Leste pada 20 Maret 1999, sehingga dia lari ke hutan di Wefiar Aitana. Dia kembali ke rumah tetapi diserang kembali pada 17 dan 19 April 1999 dan sesudahnya dia lari ke Kakae Uma.³³² Komisi menerima laporan lain yang mengatakan bahwa tujuh orang lelaki melarikan diri ke pergunungan di Luca. Mereka akhirnya tertangkap oleh seorang Babinsa dan ditahan di Koramil di Kota Viqueque. Mereka dibebaskan pada 15 April dan sekali lagi kembali ke hutan.³³³

370. Seorang wanita dari Desa Dilor (Lacluta, Viqueque) menceritakan mengenai serangan terhadap rumahnya oleh milisi Tim Makikit pada 20 Maret 1999. Karena milisi gagal menangkap anak laki-lakinya yang telah lebih dulu melarikan diri, mereka pindah ke rumah orang lain yang dikira prokemerdekaan. Tetapi orang itu juga telah melarikan diri. Milisi kemudian menjarah harta benda keluarga tersebut.³³⁴

371. Komisi juga menerima laporan yang menyatakan bahwa seorang wanita dari Timor-Leste dan keluarganya melarikan diri dari rumahnya di Desa Dilor (Lacluta, Viqueque) ke Laline, setelah mendengar bahwa akan ada serangan oleh milisi Naga Merah. Dia ditemukan oleh anggota-anggota Koramil yang mengancam dengan senjata ketika berusaha mendapatkan informasi tentang keberadaan seorang anggota keluarga yang aktif dalam gerakan klandestin.³³⁵

372. Komisi telah menerima beberapa laporan mengenai penahanan tiga orang pegawai negeri di Lacluta oleh Tim Makikit, yang dipimpin oleh seorang Timor, F4. Setelah bersumpah untuk “memberantas para pegawai negeri yang diketahui bermuka dua,” F4 dan sekitar sepuluh orang anggota milisi mencari ketiga orang korban di Rade Uma, Dilor. Mereka membawa Arthur ke markas Koramil di Lacluta, tapi memperbolehkan Filomeno dan José Andrade untuk datang tanpa ditemani pagi berikutnya. José Andrade, yang terluka oleh panah malam itu oleh seorang milisi F38, lari ke gunung dengan dua orang temannya. Setelah meminta perlindungan dari pastor lokal dan ditahan sebentar, mereka melarikan diri ke Dili.³³⁶

Covalima

373. Di Covalima, Gereja Ave Maria di Suai sudah dipakai sebagai tempat mengungsi pada Februari 1999. Milisi Mahidi, yang berbasis di Cassa, Ainaro, telah membunuh sekurangnya lima penduduk sipil di Galitas (Quimaki, Zumalai, Covalima) pada 25 Januari 1999.³³⁷ Sementara milisi Mahidi melanjutkan operasinya di Subdistrik Zumalai dan Suai, milisi Laksaur, yang dibentuk pada awal Januari 1999, mulai meneror penduduk di Suai, Tilomar, dan subdistrik lainnya di Covalima.

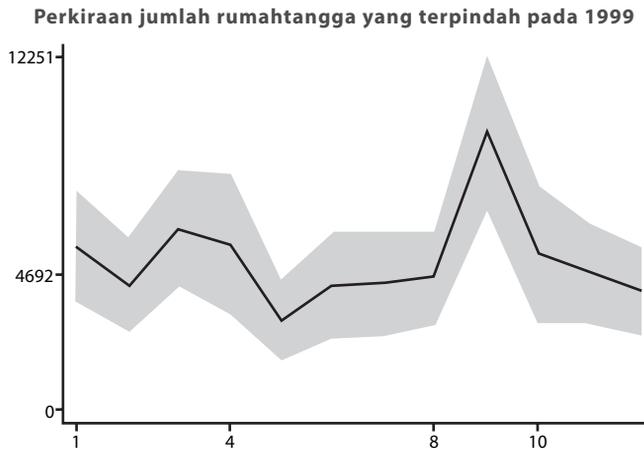
374. Maria Amaral memberitahu Komisi bahwa pada Februari 1999 F5, pemimpin milisi Sakunar, dan para anggotanya mengancam para warga kompleks perumahan murah di Desa Salele (Tilomar) yang dianggap prokemerdekaan. Menurut kesaksiannya, sekitar 200 orang mengungsi di gereja Suai. Mereka tinggal di sana sampai waktu pemungutan suara, kemudian ribuan orang lainnya ikut bergabung sampai saat gereja diserang pada 6 September 1999.³³⁸ Pada Maret para anggota milisi sudah mulai memfokuskan perhatiannya pada orang-orang yang mengungsi

di gereja, yang mereka pandang sebagai pendukung kemerdekaan. Seorang pria dari Timor-Leste mengatakan kepada Komisi bahwa ketika dia ditangkap oleh milisi Laksaur pada 13 Maret 1999, dia diberitahu akan dibunuh jika mencari perlindungan di Gereja Ave Maria.³³⁹ Pada Maret 1999, suasana teror yang diciptakan dengan kekerasan milisi setempat begitu mendesaki rakyat, sehingga sekadar sangkaan polisi dan TNI bahwa para penduduk desa adalah pendukung kemerdekaan sudah cukup untuk membuat penduduk lari ketakutan ke pergunungan atau Gereja Ave Maria di Suai.³⁴⁰ Pada bulan-bulan berikutnya, gereja menjadi episentrum intimidasi milisi dan TNI dan kekerasan terhadap rakyat yang mengungsi dari rumah mereka.

375. Pada akhir Maret, masalah perpindahan internal ini sudah dianggap cukup serius sehingga organisasi nonpemerintah yang berbasis di Dili memutuskan merancang mekanisme untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan.* Dalam sebuah laporan kegiatan untuk periode Maret-Mei 1999, organisasi-organisasi nonpemerintah lokal mencatat sejumlah 12.073 orang yang berpindah internal (IDP) yang mereka ketahui saat itu. Jumlah ini terdiri atas 2.670 orang berpindah ke Dili dari berbagai distrik dan 9.403 orang berpindah di distrik-distrik. Laporan tersebut memberikan gambaran terperinci yang menunjukkan konsentrasi besar orang-orang berpindah di lokasi-lokasi spesifik: 2.753 orang di Gariana (Vatuvou, Maubara) berpindah dari Kota Maubara dan Desa Vatuvou; 375 orang tinggal bersama para biarawati Karmelitas di Lisadila (Maubara, Liquica); 3.033 orang di Sare (Hatolia, Ermera), sebagian besar dari subdistrik tetangga Maubara; 2.753 orang di gereja Suai, sebagian besar dari Tilomar; dan 489 orang di kota Viqueque dari desa-desa tetangga.³⁴¹

* Sekretariat Darurat (posko) untuk pengungsi internal (IDP) dibentuk pada 27 Maret 1999 oleh organisasi nonpemerintah lokal, organisasi gereja, para sukarelawan, dan perwakilan dari masyarakat berpindah, setelah diselenggarakan suatu lokakarya kesiapan bencana yang diadakan oleh Yayasan HAK bekerjasama dengan Oxfam Australia. Tujuannya adalah untuk mengatur bantuan kemanusiaan oleh organisasi nonpemerintah lokal, juga untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang pengungsi internal (IDP). Anggotanya termasuk Yayasan HAK, Etadep, Caritas, Timor Aid, Yayasan Kasimo, Biahula, dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan/Volunteers for Humanity (Jakarta).

Perpindahan massal pertama, April 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

376. Pada Maret 1999 negosiasi-negosiasi tingkat menteri Indonesia dan Portugal difasilitasi oleh PBB, berlangsung di New York. Pembahasan tersebut berupaya mencapai kesepakatan mengenai cara yang dapat digunakan untuk memberi pilihan kepada rakyat Timor-Leste, antara menerima atau menolak 'otonomi luas' yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Pada April, yakni bulan menjelang Persetujuan 5 Mei, terjadi lonjakan kekerasan yang menyebabkan ribuan orang berpindah.

377. Meskipun terjadi kekerasan sporadis di bulan-bulan awal 1999, acara-acara pelantikan milisi dari awal April menyulut gelombang kekerasan terorganisasi, khususnya di distrik-distrik barat. Komisi menerima lebih daripada 120 pernyataan dari distrik-distrik barat, termasuk Liquiça, Dili, Bobonaro, Ermera, Manufahi, dan Oecussi, yang menggambarkan insiden-insiden kekerasan yang mengakibatkan pemindahan selama April. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia besar terjadi di Liquiça, Cailaco (Bobonaro), dan Dili (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

Liquiça

378. Di Distrik Liquiça milisi Besi Merah Putih memulai kampanye kekerasan pada 5 April, ketika milisi BMP dari Maubara menyerang Kota Liquiça.³⁴² Setelah penyerangan tersebut, paling tidak ada tujuh orang mati atau hilang dan 150 rumah terbakar. Lebih daripada seribu orang mencari perlindungan di gereja utama dan rumah pastor paroki di Kota Liquiça.

379. Milisi BMP mengepung gereja tersebut keesokan harinya. Setelah berjam-jam melakukan negosiasi menegangkan di mana polisi meminta pastor menyerahkan seorang pemimpin CNRT, milisi BMP dengan dukungan polisi dan militer Indonesia menyerang kompleks gereja tersebut. Antara 60 sampai 100 orang terbunuh atau hilang selama penyerangan ini.³⁴³ (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, untuk cerita lebih terperinci mengenai pembantaian di gereja Liquiça.)

380. Gelombang pembunuhan tersebut berlanjut dan menyebar ke daerah-daerah lain di distrik tersebut. Ribuan orang lari ke gunung, termasuk ke Sare, di Desa Asulau (Hatolia, Ermera), yang dianggap dikuasai Falintil.³⁴⁴ Sebagian orang dipindah paksa oleh BMP dan militer Indonesia ke Maubara dan Timor Barat.³⁴⁵

381. Kekerasan pada April di Distrik Liquiça tidak berakhir dengan pembantaian di gereja tersebut. Penduduk desa dipaksa pindah dari rumah mereka di Luculai, Loidahar, dan Darulete di Subdistrik Liquiça ke Kota Liquiça, di mana mereka menjadi korban intimidasi dan penganiayaan, dan ditekan untuk mendukung otonomi. Kaum lelaki dipaksa bergabung dengan kelompok milisi atau lari. Orang-orang juga dipaksa mengibarkan bendera Indonesia, membangun “pos-pos jaga” milisi, dan berpartisipasi dalam patroli “jaga malam” untuk mencari dan menangkap para aktivis kemerdekaan. Anak-anak perempuan dan perempuan muda dipaksa menghadiri pesta-pesta di mana mereka harus berdansa untuk milisi.³⁴⁶ Dalam suasana kekerasan dan intimidasi ini penduduk terus mengungsi dari Liquiça demi keamanan mereka. Sekitar 150 orang melarikan diri ke Dili, mencari perlindungan di rumah Manuel Carrascalão, seorang tokoh masyarakat dari Liquiça. Dua minggu kemudian mereka menjadi korban serangan milisi berikutnya, ketika kelompok-kelompok milisi menyerang rumah Manuel Carrascalão di Dili (lihat paragraf 399, di bawah).

Bobonaro

382. Pada 8 April 1999 sebuah pawai besar dilaksanakan di Maliana, ibukota Distrik Bobonaro, untuk mengumumkan pelantikan cabang distrik Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK) kelompok-kelompok milisi di Timor-Leste. FPDK adalah kelompok politik pro-otonomi yang baru dibentuk, yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan sipil dan militer. Yang hadir, antara lain, adalah komandan Kodim, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; kepala intelijennya, Sutrisno; João Tavares; dan Bupati Guilherme dos Santos. Pegawai negeri sipil kabupaten diharuskan menghadiri pawai tersebut, di mana pada saat itu Letnan Kolonel Siagian dan João Tavares secara terbuka mengancam akan membunuh para pendukung kemerdekaan.³⁴⁷ Setelah upacara tersebut, dikeluarkan perintah agar semua rumah mengibarkan bendera Indonesia; jika tidak, penghuninya akan dianiaya. Lebih daripada sepuluh orang pemimpin prokemerdekaan terbunuh dan terutilasi dalam minggu-minggu berikut. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.) Pada akhir April, beberapa ratus orang telah mengungsi ke gereja Maliana dan berharap bahwa para pastor dapat melindungi mereka dari kekerasan yang semakin meningkat.³⁴⁸

383. Pada 12 April 1999, kendaraan pemimpin pro-otonomi, Manuel Gama Soares, yang dikawal TNI, disergap di Poegoa (Cailaco, Bobonaro). Gama dan seorang prajurit TNI ditembak mati oleh para pelaku yang tidak diketahui. Sebagai balasan, pada hari yang sama prajurit-prajurit TNI dan Halilintar mengumpulkan lelaki, perempuan, dan anak-anak dari desa-desa sekitar dan membawa mereka ke Koramil di Marco. Dalam dua insiden yang berbeda, tujuh laki-laki dieksekusi ketika dalam tahanan TNI (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Jasad-jasad mereka dipertontonkan pada masyarakat sepanjang hari, sepertinya sebagai peringatan untuk meneror masyarakat. Malam itu jasad-jasad tersebut dipindahkan dan tidak pernah ditemukan kembali.³⁴⁹

384. Dakwaan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili mengatakan bahwa lebih banyak lagi kejadian yang menyusul insiden Cailaco.³⁵⁰ Antara 12 dan 13 April 1999, di Subdistrik Cailaco dan Kota Maliana, rumah para pendukung kemerdekaan dibakar dan harta benda mereka dijarah. Pada 13 April 1999, para penduduk Desa Daudo dikumpulkan dan dipaksa oleh anggota-anggota TNI untuk pindah ke Desa Biadila. Para laki-laki juga dipaksa bergabung dalam milisi Guntur yang berbasis di Cailaco. Pada 14 April 1999, pada saat pemakaman Manuel Gama, João Tavares memberikan pidato yang menjanjikan akan membunuh semua anggota Falintil dan pendukungnya. Komandan distrik TNI, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, juga memberitahu para pelayat bahwa jika ada pendukung prokemerdakaan di antara mereka, mereka akan bernasib sama dengan orang-orang yang telah dibunuh. Pada hari-hari berikutnya TNI dan anggota-anggota milisi pergi ke berbagai desa di Cailaco yang diyakini mendukung kemerdekaan. Di bawah ancaman mati, penduduk desa dipaksa pindah ke kamp-kamp di Samutaben dan Raiheu.

385. Pada 15 April sekitar 700 sampai 800 penduduk Goulolo dipaksa pindah ke Turema. Setelah dipindahkan, para laki-laki dipaksa bergabung dengan milisi Guntur yang baru saja dibentuk. Pada 16 April penduduk Raiheu di Subdistrik Cailaco (sekitar 800-1000 orang) dipaksa pindah ke Desa Ritabou di Subdistrik Maliana.³⁵¹

386. Anggota-anggota TNI dan milisi Guntur dan Halilintar berkumpul untuk apel di Koramil di Marco pada pagi hari 18 April. Dengan dihadiri perwira-perwira TNI, komandan milisi Halilintar, F6, seorang Timor, memberitahu para anggota milisi bahwa mereka akan pergi ke desa-desa di pergunungan sekitar dan menghancurkan rumah para pendukung kemerdekaan. Para anggota milisi juga diberitahu untuk menembak siapapun yang membuat masalah atau melarikan diri. Para anggota milisi Guntur dan Halilintar berpencar dalam kelompok-kelompok dan pergi ke Bisale, Samutaben, Asalau, Adusleten, dan Kalicoe dan menjarah, membakar, serta menghancurkan rumah para pendukung kemerdekaan.³⁵²

387. Antara 14 dan 19 April, anggota TNI dan sejumlah grup milisi dari Distrik Bobonaro pergi ke Manapa di Subdistrik Cailaco dan memaksa mereka berjalan kaki ke Dusun Samutaben. Banyak lelaki pendukung kemerdekaan sudah lari meninggalkan Manapa. Pada atau sekitar 19 April, anggota dari milisi DMP

(Dadurus Merah Putih) pergi ke Manapa dan mulai membakar desa tersebut dan menghancurkan rumah-rumah.³⁵³

388. Kekerasan berlanjut dan menyebar ke daerah-daerah lain termasuk Subdistrik Atabae. Komisi menerima banyak kesaksian mengenai pemindahan paksa oleh milisi Halilintar dan Armui, di bawah komando F6, terhadap orang dari desa-desa di Subdistrik Atabae ke desa-desa lain di subdistrik tersebut, seperti Koilima dan Atabae, dan ke Timor Barat.³⁵⁴ Yang lain lari ke gunung untuk menghindari kekerasan tersebut.³⁵⁵

Covalima

389. Pada April 1999 milisi Laksaur telah mulai menyerang para pendukung prokemerdekaan di Kota Suai dan subdistrik lain di sekitarnya. Komisi menerima setidaknya 17 kesaksian tentang insiden penuh kekerasan yang menyebabkan pemindahan di Covalima pada April 1999.³⁵⁶

390. Rosantina de Araújo menceritakan kepada Komisi tentang sebuah serangan pada 9 April 1999 oleh milisi Laksaur. Dengan senjata modern, mereka menyerang Nainare (Kota Suai, Covalima) dari pos mereka di Leoqore. Penduduk sipil melarikan diri ke hutan karena milisi membakar dan menghancurkan harta benda mereka.³⁵⁷ Insiden serupa terjadi pada hari yang sama di Holpilat (juga di kota Suai), yang mengakibatkan ratusan penduduk sipil lari ke hutan.³⁵⁸

391. Serangan-serangan tersebut berlanjut sampai April, menyebabkan ratusan orang lari dari rumah. Pada 12 April 1999 milisi Laksaur mendobrak pintu rumah Madalena Moniz di Asumaten (Debos, Kota Suai). Mereka mencari suaminya, yang telah lebih dulu melarikan diri.³⁵⁹ Pada hari yang sama, di Camanasa (Kota Suai), Francisco Cardoso, bendaharawan di Departemen Pendidikan setempat, dianiaya oleh komandan Laksaur, F7, seorang Timor. Cardoso juga diancam mati jika dia tidak menahan gaji para guru yang mendukung kemerdekaan. Istri Francisco Cardoso, Felismina de Jesus, dan saudara perempuannya, Angela Maia, terpaksa lari ke Lospalos setelah diberitahu bahwa jika mereka menjadi "gundik" bagi para pemimpin milisi, Francisco Cardoso akan dijamin aman.³⁶⁰

392. Ermelinda Moniz menceritakan kepada Komisi tentang pembunuhan brutal setidaknya tiga orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan di Nikir Raihun (Foholulik, Tilomar, Covalima) pada 23 April 1999. Salah satu korban dipenggal kepalanya (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Di bawah pimpinan F5, seorang Timor, milisi kemudian membakar rumah-rumah di sekitarnya, menyebabkan penduduk melarikan diri ke hutan. Tiga penduduk sipil ditembak dari belakang ketika mereka berusaha melarikan diri.³⁶¹

393. Julião Gusmão ditahan oleh milisi Laksaur di Leogore pada 24 April. Dia dipukuli dan diinterogasi tentang aktivitas para saudaranya. Ketika dia dibebaskan, dia tidak kembali ke rumah melainkan mencari perlindungan di desa lain, yakni di Oeges. Dia kemudian pindah ke gereja Suai.³⁶²

394. Paulus Vicente mengatakan kepada Komisi bahwa pada 24 April dia diculik oleh milisi Laksaur dari rumahnya di Belulic Leten, Fatumean, lalu dibawa ke pos Laksaur setempat. Di situ dia dipukuli oleh setidaknya enam orang anggota milisi yang dia kenali. Setelah ditahan di sana selama satu minggu, Paulus melarikan diri ke Kota Suai.³⁶³

395. Pada 26 April Francisco Espirito Santo dan Vicente Alves diserang dan diculik di Debos (Suai, Covalima) oleh sepuluh orang milisi Laksaur. Mereka ditahan di pos Laksaur di Loigore selama sekitar seminggu. Kemudian mereka dibebaskan setelah menandatangani surat pernyataan kesetiaan kepada pro-otonomi. Karena mereka tidak merasa aman, mereka mengungsi ke hutan.³⁶⁴

396. Komisi menerima bukti bahwa para perempuan rentan terhadap kekerasan seksual pada saat pemindahan mereka (Lihat Bab 7.7: Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual). Setidaknya ada tiga kasus kekerasan seksual terhadap para perempuan Covalima yang diketahui terjadi pada April 1999. WL melaporkan perkosaan terhadap dirinya oleh seorang anggota milisi Laksaur ketika dia lari dari rumahnya dan mencari perlindungan pada saudara-saudaranya yang merupakan anggota Laksaur.³⁶⁵ Pada 25 April 1999 rumah YL diambilalih oleh milisi Laksaur, yang dipimpin oleh F5, untuk digunakan sebagai pos milisi. Suaminya telah lari ke hutan, dan YL menjadi korban perbudakan seksual.³⁶⁶ ZL mengungsi ke Labarai di Betun, Atambua (Timor Barat, Nusa Tenggara Timur) bersama lima orang anggota keluarganya. Setibanya mereka di sana, F8, seorang Timor dan anggota milisi Mahidi, menanyakan kartu identitas mereka. Karena tidak bisa menunjukkan kartu-kartu tersebut, mereka dipaksa memberi “sumbangan” uang tunai. F8 kemudian memaksa ZL untuk mengikutinya ke sebuah sawah terpencil, sembari mengata-ngatainya dengan kata-kata kotor. Dia membawa ZL ke sebuah gubuk kosong akan tetapi ZL berhasil melarikan diri.³⁶⁷

Dili

397. Pada 17 April 1999 Apel Akbar para pendukung pro-otonomi dan milisi dari segala penjuru negeri terjadi di depan kantor gubernur di Dili untuk melantik organisasi induk milisi, Pasukan Pejuang Integrasi (PPI). Di depan pejabat-pejabat Indonesia, Eurico Guterres, mantan ketua Gardapaksi (Garda Muda Penegak Integrasi), secara terbuka mengumumkan niatnya untuk membunuh para pendukung prokemerdekaan. Sebuah laporan rahasia TNI mengutip kata-katanya:

Pasukan Aitarak akan melaksanakan operasi sisir terhadap anggota pegawai negeri sipil yang sudah memakan dan menggunakan fasilitas dinas tetapi mengkhianati perjuangan integrasi. Pasukan Aitarak akan memberantas siapa saja baik pejabat, tokoh masyarakat maupun pengusaha yang benar-benar sudah membantu perjuangan kelompok anti-integrasi. Pasukan Aitarak tidak segan-segan menghambisi Ir. Mário Viegas Carrascalão beserta kelompoknya yang telah mengkhianati Deklarasi Balibó.³⁶⁸

398. Pada akhir apel tersebut milisi Aitarak mengamuk di Kota Dili. Dengan mengincar orang-orang yang dicurigai berhubungan dengan gerakan prokemerdekaan, mereka menghancurkan lima kendaraan dan tujuh bangunan, termasuk kantor surat kabar lokal *Suara Timor Timur*.³⁶⁹ Julio da Costa Xavier menggambarkan bagaimana para anggota milisi Aitarak menyerangnya di rumahnya di Metiaut, Bidau Santana (Dili Timur, Dili) setelah menghadiri apel tersebut. Ia berhasil melarikan diri ke daerah Laga (Baucau) yang relatif aman.³⁷⁰

399. Akhirnya milisi Aitarak berkumpul di depan rumah Manuel Carrascalão, tempat terdapat keluarganya dan para penduduk desa yang mengungsi dari kekerasan di Liquiça, dan membunuh setidaknya 12 orang (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

400. Hari kampanye milisi ini, 17 April 1999, menandai permulaan pemindahan besar-besaran di dalam Dili. Banyak orang mulai mencari perlindungan di gedung-gedung gereja, berharap mereka akan terlindung oleh kesucian tempat tersebut. Orang-orang lain mencari perlindungan bersama para anggota keluarga atau di wilayah-wilayah tidak berpenduduk—organisasi-organisasi nonpemerintah setempat yang menyediakan bantuan kemanusiaan bagi orang-orang yang berpindah di Dili mendokumentasikan sekurangnya 44 lokasi di Dili Timur dan Barat, tempat lebih daripada 2.000 orang mencari perlindungan jauh dari rumah mereka.³⁷¹

Oecussi

401. Setelah peresmian Pasukan Pejuang Integrasi di Dili pada 17 April 1999, para anggota milisi Sakunar kembali ke Distrik Oecussi dengan membawa senjata-senjata otomatis. Di sana mereka mulai menyerang pemimpin-pemimpin CNRT dan meneror masyarakat. Pada saat yang sama, milisi mulai merekrut para pemuda. Kepala-kepala desa yang menolak menyediakan orang untuk direkrut, dan para pemuda yang menolak bergabung, diancam bahwa keluarga mereka akan dibunuh dan rumah mereka dibakar.

402. Komisi menerima sekurangnya sepuluh pernyataan yang menceritakan insiden kekerasan yang mengakibatkan pemindahan.³⁷² Julio Tout melaporkan bagaimana dia dan tiga orang lelaki lain—Antonio Beto, José Sufa, dan José Poto—ditangkap oleh milisi Sakunar dan dibawa ke Kampung Bebo. Julio berhasil kabur ke Desa Anfoang (Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Indonesia).³⁷³ Yang lainnya, ditambah dengan Domingos Ele, ditahan di sebuah sekolah dasar, tempat mereka dipukuli dengan hebat selama dua hari. Antonio Beto meninggal ketika di dalam tahanan. Milisi Sakunar kemudian membakar rumah para tahanan dan rumah-rumah lain.³⁷⁴ Antonio de Jesus memberitahu Komisi bagaimana milisi Sakunar datang mencarinya pada 25 April 1999. Dia lari ke hutan, meninggalkan keluarganya di rumah. Tapi, karena mereka juga diancam, istri dan anak-anaknya menyusulnya ke hutan tak lama kemudian.³⁷⁵ Dalam insiden lain, tiga laki-laki Timor ditahan oleh prajurit-prajurit Indonesia dari Kodim 1639 Oecussi. Mereka dibawa ke Martinho Lelan, kepala Desa Lela Ufe, dan dipukuli oleh milisi Sakunar.

Walau terluka parah, mereka berhasil melarikan diri ke hutan.³⁷⁶ Bentu Bobo memberitahu Komisi bagaimana dia dan tujuh lelaki lain dipaksa bergabung dengan milisi di Hoinino oleh komandan Sakunar dari Oesilo, F10, seorang Timor. Untuk menghindari perekrutan paksa ini, mereka melarikan diri ke hutan.³⁷⁷

403. Pada akhir April situasi di Oecussi sangat menegangkan, dan banyak orang melarikan diri ke hutan atau ke Timor Barat. Pada saat peresmian Sakunar pada 1 Mei, para pemimpin CNRT dibekuk di bawah todongan senjata dan dipaksa meminum darah mereka sendiri dan mendeklarasikan secara terbuka bahwa CNRT telah dibubarkan dan memberikan dukungan pada otonomi. Anggota-anggota TNI berseragam secara terbuka memukuli para pemimpin CNRT pada apel tersebut.³⁷⁸

Ermera

404. Menurut kesaksian para saksi mata, April menandai permulaan gelombang kekerasan di Distrik Ermera. Seorang Timor dan komandan milisi Darah Merah mengatakan kepada Komisi bahwa pada April komandan Kodim Ermera memberi sedikitnya tujuh pucuk persenjataan modern dan dua kendaraan militer kepada kelompok milisi tersebut. Dua ratus orang anggota Darah Merah melancarkan serangan terhadap para pendukung CNRT di Hatolia. Para anggota CNRT melawan balik dan seorang anggota milisi dan dua anggota CNRT terbunuh dalam pertempuran tersebut.³⁷⁹

405. Komisi menerima sejumlah pernyataan yang menggambarkan kasus kekerasan pada April 1999 di Ermera, Gleno, dan Atsabe, yang menyebabkan masyarakat lari dari rumah mereka.³⁸⁰

406. Erminia Soares do Ceu dari Potete (Ermera) menyaksikan operasi militer yang dilakukan pada 10 April 1999 oleh para prajurit Indonesia dari Kodim di Gleno dan milisi Darah Merah, saat lusinan rumah di Ermera dibakar.³⁸¹ Sasaran pembakaran ini termasuk rumah Alexandre dos Santos dan istrinya Regina de Araújo, keduanya pendukung kemerdekaan. Mereka lari ke hutan ketika rumah mereka dibakar dalam insiden tersebut.³⁸² Sebagian yang melarikan diri, seperti Saturnino Borromeo, mencari perlindungan pada pasukan Falintil.³⁸³

Kondisi pengungsi internal di Sare, Ermera, dan Faulara, Liquiça

Dari 2 sampai 4 Juli 1999, sebuah kelompok yang terdiri atas organisasi-organisasi nonpemerintah yang disertai oleh pejabat-pejabat UNAMET dan UNHCR, mendistribusikan 25 ton makanan dan bantuan kemanusiaan lain kepada Pengungsi Internal (*Internally Displaced Persons*, IDP) di Sare. Berikut ini adalah kutipan dari laporan tentang kunjungan tersebut:

“Di Sare, kami menemukan bahwa terdapat 3.800 IDP dari tujuh desa: Vatuboro, Cuico, Lisadila, Vatuvou, Maubaralisa, Vaveknia, Guguleur (semua di Maubara, Liquiça). Dalam perjalanan kami ke Sare, kami melihat Desa Cuico dan Lisadila terbakar habis, tanpa tersisa satu rumahpun. Setelah satu hari di Sare, kami menemukan lokasi kedua, Faulara, yang memiliki 3.500 IDP menurut para pengungsi sendiri.

“Kami diberitahu oleh kepala Desa Asulau (Sare adalah sebuah kampung di Asulau) bahwa orang-orang berpindah tersebut mulai berdatangan pada Februari, [ketika] serangan-serangan milisi dimulai. Sebelum kekerasan tersebut Asulau memiliki populasi 1.449, dan sekarang Asulau memiliki lebih daripada 5.000 orang. Sebelumnya pada Februari-Maret terdapat sekitar 5.000 IDP di Asulau, sebagian telah pindah ke Atabae (Bobonaro) dan Hatolia (Ermera), dan sekarang di sini tertinggal lebih daripada 3.000. Menurut kepala Desa Asulau, sebagian besar rumah di ketujuh desa tersebut telah dibakar, kecuali rumah orang-orang yang setuju bergabung dengan milisi. Menurutnya, milisi berusaha mengarahkan orang-orang tersebut ke Kota Maubara di mana mereka akan berada di bawah kendali milisi agar mereka memilih otonomi. Keluarga-keluarga telah terpisah, sebagian melarikan diri ke wilayah yang lebih aman, yang lainnya terpaksa menurut pada rencana milisi untuk merelokasi massa ke Maubara.

“Sejak Februari sekurangnya lima [orang] telah terbunuh oleh Besi Merah Putih dan Halilintar, dua grup milisi yang beroperasi di sini. Orang-orang ini—Sabilu (21 tahun), Silvanu (35 tahun), Maubisa (50 tahun), Eduardo (18 tahun), dan Amelia (60 tahun)—dibunuh ketika mereka mencoba kembali ke rumah mereka untuk memetik ubi dan mencari makanan bagi keluarga mereka. Penembakan terakhir terjadi pada 16 Juni. Saat kami di sana, kami juga diberikan daftar 23 perempuan dari satu desa yang telah diperkosa milisi. Menurut para pemimpin masyarakat, para perempuan dipanggil ke pos milisi di mana mereka dilecehkan dan diperkosa. Mereka juga memberi kesaksian tentang fakta bahwa serangan-serangan milisi didukung oleh BTT [Batalion Tempur Teritorial, yang ditugaskan ke wilayah tersebut], Koramil Maubara, dan Brimob. Camat dan komandan Koramil memimpin aktivitas para milisi.

“Pada Februari masyarakat lokal membagi makanan mereka kepada orang-orang yang berpindah, tetapi pada Maret persediaan makanan mereka tidak dapat lagi menunjang aliran kedatangan orang seperti itu... Sejak Maret para IDP harus mencari makanan sendiri di hutan-hutan dan memulung apapun yang tersisa di kebun mereka. Tapi ini sangat berbahaya karena mereka harus memasuki wilayah-wilayah yang dikontrol BMP. BMP tidak saja membakar rumah dan lumbung

mereka, tapi juga menjarah apapun yang dapat dijual, seperti atap seng dan ternak. Mereka juga membakar dan menghancurkan ladang dan kebun. [Menurut para IDP]: ‘Ketika sudah aman kami ingin kembali ke rumah kami, tapi di mana kami akan tinggal?’, sambil menyebutkan bahwa semua yang mereka miliki telah dihancurkan. ‘Ini seperti kita kembali ke 1975,’ kata seorang laki-laki tua. Seorang pengungsi lain memberitahu kami bahwa ini adalah saatnya untuk mulai mempersiapkan ladang mereka untuk musim tanam berikut. Ini berarti bahwa mereka tidak dapat mulai bertanam tepat waktu ketika musim hujan mulai pada Oktober.

“Sebagian dari para pengungsi internal dari Cuico (Maubara, Liquiça) menyampaikan bahwa seluruh 400 keluarga telah kehilangan rumahnya di sana. IDP dari Cuico berjumlah sekitar 2.250 dari seluruh pengungsi di Sare sekarang. Di Cuico, seperti di desa-desa lain, mereka bisa menanam jagung, buncis, ubi, dan kopi. Ketika mereka lari dari desanya, mereka belum sempat memanen hasil tanamnya. Bulan ini adalah awal dari panen kopi, tapi tampaknya pihak militerlah yang akan memetik kopi tersebut.

“Menurut kepala Desa Asulau, sekurangnya tiga sampai empat orang meninggal setiap hari. Di Asulau ada sebuah puskesmas, tapi perawatnya lari ke Hatolia pada Maret 1998, dan sebelum itu pun tidak ada persediaan medis. Banyak pengungsi yang terjangkit malaria, infeksi pernafasan, diare, dan disentri. Ada sumber air bersih tapi tidak mencukupi. Hanya orang-orang yang lebih dulu mencapai sumber tersebut yang memiliki cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Kini, mereka makan ubi dan ‘apapun yang bisa dimakan kambing, kami bisa makan’.

“Faulara adalah sebuah lokasi transmigrasi di Desa Leolata (Liquiça) yang dibuka pada 1996. Menurut seorang pemimpin masyarakat wilayah ini, terdapat 1.600 penduduk asli. Sekarang terdapat 5.100 orang, yang berarti populasi IDP adalah 3.500. Orang-orang IDP sudah berdatangan sejak Januari dan Februari, sekitar 70 orang telah meninggal karena penyakit sejak Januari. Karena banyak yang sakit, masyarakat memutuskan memisahkan mereka ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Contoh, dari 3.500 orang tersebut, sekarang terdapat 500 IDP di Bantur yang berjarak sekitar 8 km dari Faulara. Tapi mereka berencana memindahkan para IDP tersebut kembali ke Faulara.

“Para IDP dan masyarakat setempat di Faulara hidup dalam rasa takut terhadap milisi. Seorang laki-laki dari Desa Asumanu (Liquiça) menceritakan bagaimana rumahnya dibakar oleh milisi dan militer. Pada 17 Mei, milisi mengelilingi rumahnya, dibantu oleh anggota

militer. Mereka menutup pintu ke arah dapur di mana di dalamnya terdapat istrinya dan tiga perempuan lain yang terjebak, kemudian membakar dapur tersebut. Istrinya dan tiga perempuan tersebut akhirnya bisa melarikan diri, tapi tiga orang lainnya meninggal pada saat serangan ini.

“Di Faulara kami juga mewawancarai seorang perempuan yang baru saja lolos dari penangkapan oleh milisi BMP di Kota Maubara. Pada Februari 1999 dia lari dari rumahnya di Maubaralisa karena adanya serangan-serangan oleh milisi terhadap Gariana. Dia dan keluarganya berada di sana sampai Maret ketika dia pindah ke Asulau. Setelah Pemilu Indonesia (Juni 1999), mereka pindah ke Faulara. Dia ditangkap pada 17 Juni ketika dia kembali ke rumahnya di Maubaralisa untuk berdoa di makam orangtuanya dan memanen ubi untuk keluarganya. Dia ditemani oleh anak perempuannya yang berumur tujuh tahun. Ketika milisi menangkapnya, dia melawan tapi kemudian mereka menangkap anaknya sehingga dia harus mengikuti. Dia ditahan selama dua minggu. Dia berkata bahwa dia ditempatkan di rumah sebuah keluarga milisi, tidak diperlakukan buruk tapi tidak diperbolehkan pergi. Ketika milisi memberitahunya bahwa dia dan yang lainnya akan dibawa ke Atambua (Timor Barat) untuk mendaftar [untuk memilih], dia melarikan diri. Ketika ditanya berapa banyak lagi yang ditahan seperti dia, menurutnya ada ribuan. Dia dan putrinya berjalan selama dua hari melalui hutan. Dia tiba pada pagi hari saat ketika kami berada di sana. Putrinya tampak sangat lemah dan letih.”³⁸⁴

407. Komisi mencatat bahwa pada April 1999 insiden-insiden kekerasan terjadi di seluruh 13 distrik. Akan tetapi, pelanggaran hak asasi manusia yang paling parah terjadi di enam distrik yang dibahas di atas. Kejadian-kejadian ini, dan lainnya yang tidak digambarkan di sini, menyebabkan pemindahan besar-besaran di seluruh Timor-Leste.

Hening sebelum badai (Mei sampai Agustus 1999)

408. Dengan kedatangan staf UNAMET dan sejumlah besar pengamat internasional pada Juni 1999, serangan-serangan fisik terhadap para pendukung kemerdekaan agak menurun.

409. Periode menjelang pemungutan suara yang direncanakan pada Agustus relatif cukup tenang. Tapi di beberapa daerah, insiden-insiden serius pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan lebih banyak pemindahan terus terjadi. Contoh-contoh pelanggaran ini termasuk: penahanan, pemerkosaan, dan penyiksaan oleh milisi terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan di

Lolotoe (Bobonaro) pada Juni 1999;³⁸⁵ pembunuhan dua mahasiswa di Hera (Dili) pada Mei; dan penyerangan terhadap kantor UNAMET di Maliana (Bobonaro). Pemblokiran jalan oleh milisi, pemindahan paksa, dan pembakaran serta penjarahan rumah-rumah terus berlangsung, tanpa pernah dihukum. Dengan semakin dekatnya hari Jajak Pendapat, terjadi peningkatan dramatis intimidasi oleh kelompok-kelompok milisi juga TNI, polisi, dan pemerintah sipil. Taktik-taktik teror ini ditujukan bukan hanya kepada orang-orang yang dianggap prokemerdekaan, tapi juga terhadap staf lokal UNAMET dan siapapun yang membantu pengungsi internal.

Keamanan pangan dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi internal

410. Kekerasan dan situasi keamanan memperburuk situasi kekurangan makanan yang tercipta karena kondisi iklim yang ekstrem. Hasil panen sudah tertekan jumlahnya pada 1998 oleh kekeringan El Niño dan pada 1999 oleh hujan La Niña yang berlebihan. Sebagai tambahan, situasi keamanan yang buruk pada Februari-Maret mempersulit penduduk untuk menanam benih dan merawat ladang mereka, sehingga makin membahayakan persediaan makanan. Pengungsian dan relokasi paksa benar-benar memutus sebagian orang dari ladangnya, sementara orang-orang yang masih di rumah mendapati keamanan pangan mereka terancam oleh pembatasan ketat terhadap mobilitas mereka selama panen jagung Juni³⁸⁶ serta penjarahan dan penghancuran panen dan ternak oleh milisi. Larangan bepergian juga menghambat pasokan komoditas makanan ke pasar-pasar.³⁸⁶ Intimidasi terhadap para pekerja kemanusiaan mengakibatkan bantuan praktis tidak dapat sampai kepada sebagian besar penduduk, yang mengakibatkan orang-orang berpindah internal semakin rentan terhadap kelaparan dan penyakit.

Serangan terhadap konvoi bantuan kemanusiaan di Liquiça

Pada 4 Juli sebuah konvoi bantuan kemanusiaan yang diadakan oleh organisasi-organisasi nonpemerintah lokal dan disertai oleh pejabat-pejabat dari UNAMET dan UNHCR, diserang oleh milisi Besi Merah Putih di Liquiça sekembalinya dari mengantarkan bantuan kepada pengungsi IDP. Beberapa pekerja organisasi nonpemerintah lokal terluka parah, seorang staf UNAMET diancam langsung dengan senjata, dan kendaraan dihantam menggunakan

* Surat jalan yang ditandatangani oleh para pemimpin milisi lokal, kepala subdistrik, dan komandan militer lokal adalah keharusan bagi siapapun yang ingin melakukan perjalanan keluar desa mereka. (UNAMET, Political Overview, Atambua-Covalima-Ainaro, 15-17 Juni 1999)

pipa dan batu-batuan. Milisi mengejar konvoi tersebut, dengan bergantung pada satu sisi salah satu kendaraan sembari mengancam para penumpang organisasi nonpemerintah dengan senjata rakitan dan golok. Pernyataan bersama yang dikeluarkan pada hari sesudah penyerangan terhadap organisasi nonpemerintah tersebut menggambarkan usaha untuk mendapat kawalan polisi, termasuk melalui pertemuan-pertemuan dengan para pejabat di markas polisi (Polda) dan gubernur berhari-hari sebelum pengiriman makanan itu, juga usaha UNAMET untuk mendapat kawalan polisi untuk perjalanan pulang.³⁸⁷ Dalam sebuah pernyataan bersama, organisasi-organisasi nonpemerintah tersebut menggambarkan serangan itu:

“Sebuah minibus biru [datang] dari arah Koramil berisi anggota milisi bersenjata. Milisi mengacung-acungkan senjata mereka dan berteriak ‘Bunuh, bunuh’ kepada para anggota misi kemanusiaan. Polisi dan anggota intelijen Indonesia di lokasi tersebut melihat kejadian ini tanpa bereaksi. Para anggota misi kemanusiaan dikejar oleh milisi dengan senapan, pisau, dan golok. Personil UNAMET mencoba turuntangan, untuk melindungi para pekerja organisasi nonpemerintah dari serangan milisi. Tembakan-tembakan pun terjadi.

“Para anggota misi kemanusiaan bergegas memasuki beberapa kendaraan kami dan kendaraan UNAMET. Kami dikejar oleh milisi, yang juga bergelayutan pada mobil UNAMET, memecahkan jendela-jendelanya. Pada satu saat sebuah senjata rakitan ditodongkan ke dalam mobil. Salah seorang anggota kami melihat sebuah senjata rakitan jatuh ke dalam mobil saat keributan itu. Enam puluh dua dari 77 orang kontingen kami berhasil lari ke Polres di Liquiça. Di Polres, para anggota misi kemanusiaan diperlakukan kasar oleh sebagian anggota polisi, sepertinya kami ini tersangka. Sebuah senjata rakitan ditemukan di lantai mobil UNAMET. Senjata ini diserahkan kepada polisi Liquiça sebagai bukti. Anggota UNAMET yang sedang dievakuasi dari Liquiça bergabung dengan kami di Polres. Setelah beberapa lama kesepuluh anggota dibawa dari Polsek. Orang-orang yang ditahan di Polsek diintimidasi dan diinterogasi. Setelah negosiasi antara polisi UNAMET dan polisi setempat, kami diperbolehkan pergi bersama konvoi UNAMET ke Polda Dili tempat kami akan diperiksa. Kami kehilangan lima pekerja organisasi nonpemerintah dan satu pengungsi. Kami tiba malam sekali di Dili. Setelah negosiasi antara Kapolda dan UNAMET, misi kemanusiaan tersebut diperbolehkan meninggalkan Polda bersama anggota UNAMET.”

Polisi tidak mengambil tindakan untuk menangkap para anggota milisi bersenjata yang tetap berada di luar kompleks polisi dan terus

berteriak mengancam para korban. Penangkapan milisi tidak pernah dilakukan. Sebaliknya satu minggu setelah serangan tersebut, polisi justru melancarkan investigasi yang agresif untuk mengangkat dakwaan pelanggaran senjata yang tidak masuk akal terhadap petugas kemanusiaan PBB, yang mereka tuduh telah membawa senjata.³⁸⁸

Ian Martin, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Jajak Pendapat Timor-Leste dan kepala Misi PBB di Timor-Leste sejak Mei sampai November 1999, menilai dampak dari serangan terhadap konvoi tersebut sebagai berikut:

“Serangan milisi terhadap konvoi Liquiça telah menghambat usaha-usaha untuk memberi bantuan, meskipun publisitas yang diakibatkan telah memaksa penguasa Indonesia untuk mengakui masalah kemanusiaan tersebut dan Habibie telah memerintahkan upaya untuk menanganinya. Bukan saja pengungsi internal yang dipandang sebagai elemen prokemerdekaan yang tidak dikehendaki (alasan utama mereka diincar), tapi juga organisasi-organisasi nonpemerintah Timor yang ingin membantu mereka. Indonesia melihat dirinya berkompetisi untuk memberikan bantuan melalui jalur-jalur pemerintah... Akibat segala hambatan dari pihak penguasa, baru pada 2 Agustus sebuah konvoi berikutnya dapat menjangkau salah satu wilayah utama pengungsian—satu bulan sesudah insiden Liquiça.”³⁸⁹

Serangan tersebut mendapatkan perhatian luas dan memaksa penguasa Indonesia mengakui bahwa intimidasi berperan dalam mencegah akses kemanusiaan. Meskipun Presiden Habibie meminta serangan tersebut dihentikan, serangan terhadap pengungsi internal terus berlanjut, tampaknya sebagai upaya mencegah orang-orang ini datang ke tempat pemungutan suara. Pada 16 Juli BMP menyerang mereka di Faulara, dan pada 18 Juli di Liquiça, mengakibatkan banyak orang kembali melarikan diri ke pergunungan.³⁹⁰

411. Angka pasti jumlah pengungsi internal sulit untuk diperkirakan. Karena seringnya berpindah dan kenyataan bahwa sebagian besar tidak berada dalam kamp resmi (sebagian besar berlindung di rumah teman atau saudara ataupun di wilayah terpencil) membuat penghitungan angka tersebut menjadi semakin sulit. Akan tetapi, masalah terbesar adalah kurangnya akses ke orang-orang terpindah tersebut oleh lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan karena kondisi keamanan yang tidak baik. UNAMET mengumpulkan data dari sumber-sumber kemanusiaan saat itu dan mengestimasi bahwa pada pertengahan Juli terdapat sekitar 40.000-60.000 orang yang berpindah, yang 80% adalah orang-orang dari wilayah perbatasan Bobonaro, Covalima, dan Liquiça.³⁹¹ Di Ermera 4.000 orang ditahan oleh milisi di Cailaco pada pertengahan Juli.³⁹²

Pengungsi kembali untuk mendaftar

412. Pada akhir Juli, orang-orang berpindah mulai pulang. Akan tetapi, kembalinya orang-orang ini dilaporkan didorong oleh keinginan untuk memberi suara dan berada bersama komunitas mereka pada saat yang genting ini, bukan karena kondisi keamanan yang membaik. Ada laporan bahwa CNRT juga menginstruksikan rakyat untuk kembali. Pada akhir Juli UNAMET melaporkan bahwa sekitar 9.000 orang yang berpindah di Liquiça telah kembali ke desa-desa di distrik tersebut atau mendaftar di Dili. Dari sekitar 5.000 orang yang lari dari Distrik Bobonaro, 3.500 telah mendaftar di Dili.³⁹³ Hasilnya, banyak orang yang kembali kepada ancaman bahaya serangan milisi atau ke lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh bantuan kemanusiaan.³⁹⁴

413. Bahaya yang semakin meningkat yang dihadapi oleh orang-orang berpindah ketika mereka keluar dari persembunyiannya dapat digambarkan oleh nasib orang-orang yang kembali ke Suai. Pada akhir Juli orang-orang yang mengungsi ke gunung dan desa-desa sekitar kembali ke Suai di mana mereka mencari perlindungan di Gereja Ave Maria. Gereja tersebut dikepung oleh milisi yang makin mengancam. Tidak ada polisi atau Brimob yang hadir mengamankan. Jumlah orang yang mencari perlindungan di gereja tersebut naik dari 700 pada 12 Juli menjadi 1.000 pada 9 Agustus dan kemudian menjadi 2.500 pada 19 Agustus.³⁹⁵ Setelah sebuah apel besar prokemerdekaan dan kunjungan oleh Perwakilan Khusus Sekjen PBB dan Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat Timor Timur (Satgas P3TT) pada 19 Agustus, bupati memberitahu seorang pastor bahwa para pengungsi di gereja tersebut adalah kelompok politik dan harus dibubarkan. Bupati memutuskan pasokan air ke gereja dalam usaha untuk memaksa para pengungsi untuk keluar dari kompleks gereja tersebut. Pasokan air dibuka kembali pada 22 Agustus menyusul protes dari UNAMET dan delegasi Kongres AS yang berkunjung.³⁹⁶

414. Di hari-hari menjelang Jajak Pendapat, berlanjut blokade jalan, patroli bersenjata, dan ancaman kekerasan terbuka apabila rakyat tidak memilih “dengan benar”. Di Bobonaro pada 10 Agustus, pertemuan antara bupati, komandan Kodim, FPKD, BRTT, dan beberapa kepala desa secara terbuka mengancam akan ada serangan-serangan apabila otonomi ditolak.³⁹⁷ Aktivitas CNRT di Covalima mengundang serangan bersenjata milisi terhadap apel-apel, kantor-kantor CNRT, dan orang-orang yang menunjukkan dukungan kepada CNRT. Baik di Covalima maupun Ainaro, para anggota milisi Mahidi dan Laksaur—banyak dari mereka yang bersenjata—berpatroli dan mengintimidasi dengan semena-mena, mengancam untuk membunuh orang-orang yang namanya ada dalam daftar para pendukung prokemerdekaan yang menurut laporan telah disediakan oleh seorang prajurit TNI.³⁹⁸

415. Pada 27 Agustus 1999 di Oecussi, para pemuka masyarakat di basis-basis prokemerdekaan mendapatkan kunjungan malam hari oleh para anggota milisi Sakunar yang mengancam akan membakar rumah mereka dan menyakiti keluarga mereka. Milisi mencegah penduduk menghadiri acara-acara CNRT, sementara 300 anggota BMP yang “sedang dalam tamasya berkemah” berkeliling dengan Sakunar,

menembakkan pistol ke udara. Kedua kelompok milisi itu melempari kantor CNRT dengan batu sepanjang malam dan sampai hari berikutnya. Para anggota CNRT meminta perlindungan polisi. Polisi memang datang tapi justru berbaris di belakang milisi dan mulai menembaki kantor CNRT selama beberapa jam, mengakibatkan enam orang terbunuh. Banyak rumah di Santa Rosa dekat bangunan CNRT dibakar dan bangunan CNRT sendiri hancur total. Ketika CNRT mengadakan acara kampanye di Padiæ, Pante Makassar, polisi berseragam menyerang mereka. Para pemimpin CNRT, pemimpin mahasiswa terkemuka, staf lokal UNAMET, pengamat pemilihan lokal dan anggota masyarakat biasa, khususnya yang berasal dari sekitar Santa Rosa, terpaksa mengungsi ke pergunungan. Sekitar 667 orang berlindung bersama di Cutete di perbukitan di sekitar Pante Makassar. Sebagian berlindung di gereja dan kantor polisi, yang lainnya dibawa paksa oleh polisi ke kantornya.³⁹⁹

416. Di Viqueque pada 21 Agustus, intimidasi dan tembak-menembak gencar di Uma Tolu dilaporkan oleh kelompok pengamat internasional, International Federation in East Timor (IFET), dalam hari-hari terakhir menjelang Jajak Pendapat. Pada 22 Agustus Babinsa dan para anggota Batalion 406 mengepung sekelompok pengungsi internal di balai desa dekat lapangan sepak bola di Uma Tolu. Seorang penduduk desa ditembak di kaki dan sembilan orang lain juga terluka. Beberapa rumah dibakar dan harta benda dihancurkan, termasuk kartu pendaftaran pemilih. Salah satu rumah yang dihancurkan adalah rumah kepala sekolah, yang telah mengorganisasi pemuda sebagai penjaga antimilisi. Sekitar 260 orang terpaksa mengungsi akibat kejadian-kejadian ini.⁴⁰⁰

417. Di tempat lain di distrik tersebut polisi tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan serangan milisi terhadap kantor pelajar prokemerdekaan dan kantor-kantor CNRT di Kota Viqueque. TNI dan anggota milisi datang ke acara penyuluhan pemilih untuk mengambil foto orang-orang yang hadir, dan mengancam akan membunuh orang-orang yang tidak memilih otonomi. Milisi mengetuk pintu rumah orang, meneriakkan kata-kata kotor, dan melemparkan batu. Pos-pos milisi dibangun di lokasi-lokasi penting, khususnya di Umatolu.

418. Di Desa Beloi sebuah kelompok keamanan lingkungan mendirikan blokade jalan. Milisi merespons dengan mendatangi desa tersebut sambil menembakkan senjatanya. Panggilan telepon ke polisi untuk meminta bantuan tidak memberikan hasil. Milisi melanjutkan serangan tersebut sepanjang hari itu dan membunuh tiga orang. Banyak orang lari ke persembunyian: 200-300 dari 600 orang pemilih sah lari dari Desa Lamaclaran; hanya empat orang lanjut usia tertinggal di Taular; 30 laki-laki lari dari Buanurak; 25-30 lari dari Mamurac. Para penduduk mengungsi ke Ossu, Raitahu, dan wilayah transmigrasi dekat wilayah tersebut. Para pengungsi di Ossu berasal dari Bubur Laran (273), Buanurak (sembilan), Loi Huno (65), dan Lia Ruca (102).⁴⁰¹

419. Ancaman kekerasan meningkat di banyak daerah pada masa kampanye. Di wilayah Bobonaro otoritas Indonesia melakukan segalanya untuk mencegah CNRT berkampanye. Kantor CNRT dihancurkan oleh milisi satu hari setelah pembukaannya.⁴⁰² CNRT terpaksa menghentikan kampanye terbuka setelah satu hari, ketika para siswa diserang oleh milisi dengan parang. Sementara itu,

kampanye pro-otonomi berlanjut dengan agresif. Pada 17 Agustus orang-orang dipaksa menghadiri apel Hari Kemerdekaan Indonesia. Orang-orang di Moleana dan Halecou dipukuli oleh milisi Dadurus dari Ritabou karena tidak datang. Milisi menyerang pusat-pusat siswa, melukai para siswa, dan menyerang sebuah pusat pemuda gereja tempat keluarga pengungsi sedang berlindung di Luguli dekat Maliana. Milisi menembaki penduduk yang sedang melarikan diri, membakar lima belas rumah, sehingga penduduk setempat terpaksa lari ke seminari.⁴⁰³

420. Di Distrik Covalima para pemimpin lokal melaporkan bahwa para pejabat militer dan pemerintah sedang aktif berkampanye dan mengeluarkan ancaman terhadap masyarakat di pertemuan-pertemuan publik.⁴⁰⁴ Pada Juli dan Agustus Laksaur memblokir jalan-jalan utama dan merampas hak milik pribadi dan makanan.⁴⁰⁵ Pada Agustus rumah tradisional 'Seri Bein' dibakar dan seluruh isinya dijarah, termasuk ternak dan makanan.⁴⁰⁶ Aktivitas milisi ini mengakibatkan peningkatan jumlah orang yang berlindung di kompleks gereja di Suai. Selain itu, seorang aktivis prokemerdekaan diculik dan dibunuh. Setelah bentrokan antara milisi dan para pendukung prokemerdekaan yang tengah menunggu untuk meninggalkan apel kampanye pada 19 Agustus, CNRT menghentikan sementara aktivitasnya.⁴⁰⁷

421. Pada 26 Agustus, hari terakhir kampanye yang dialokasikan bagi kubu pro-otonomi, milisi melakukan intimidasi agresif, khususnya di Dili, tempat mereka berkumpul dari segala penjuru negeri. Eurico Guterres berpidato di depan apel pro-otonomi yang dihadiri 15.000 orang di stadion Dili. Dia menjanjikan bahwa Timor-Leste akan menjadi "lautan api" jika Jajak Pendapat ini dimenangi kubu kemerdekaan.⁴⁰⁸ Kekerasan pada hari itu memakan delapan jiwa; semua kecuali satu di tangan milisi atau pasukan keamanan.⁴⁰⁹ Milisi secara langsung mengganggu atau mencegah penduduk menghadiri aktivitas penyuluhan pemilih UNAMET dan acara kampanye CNRT.⁴¹⁰ Ancaman terhadap staf lokal UNAMET meningkat pesat pada pertengahan Agustus, menyebabkan banyak orang membatalkan kontraknya dan lari ke hutan.⁴¹¹

422. Pada hari pemungutan suara, 30 Agustus, di Boboe Leten (Atsabe, Ermera), milisi bersenjatakan senapan dan batu menyerang sebuah tempat pemungutan suara, membunuh dua orang staf lokal UNAMET, dan mencoba membunuh yang ketiga. Meskipun Brimob ada di situ, mereka tidak melakukan apa-apa untuk mencegah hal ini. Tempat pemungutan suara khusus terpaksa didirikan di Asualu, Sare, bagi para pengungsi yang terlalu takut pulang untuk memilih. Bagaimanapun, di antara orang-orang yang pulang, sebagian besar—khususnya para pemimpin CNRT, staf UNAMET, dan para aktivis siswa—kembali ke tempat persembunyian mereka setelah melakukan pemungutan suara, mengantisipasi akan adanya kekerasan. Di Bobonaro banyak orang menyembunyikan persediaan dan harta benda mereka di gunung dan hutan sebagai persiapan datangnya kerusuhan. Kepala Desa Atabae (Bobonaro) melaporkan bahwa seorang pemimpin Halilintar memberitahu mereka pada Juli untuk mengemas barang-barang mereka karena jika mereka tidak pergi setelah pemungutan suara, mereka akan dibunuh. Para pendukung otonomi langsung pergi menuju Atambua (Timor Barat, Indonesia).⁴¹²

Pemindahan dan deportasi besar-besaran, September 1999

423. Menyusul pengumuman hasil Jajak Pendapat, serangan kekerasan yang hebat dilampiaskan terhadap penduduk Timor. Komisi menerima 713 pernyataan yang menggambarkan tindakan pemindahan paksa dan penghancuran harta benda pada September 1999.⁴¹³ Bukti bahwa ada operasi pembumihangusan terorganisasi, dengan menghancurkan harta benda dan mendeportasikan rakyat secara massal, samasekali tidak bisa dipungkiri. UNHCR memperkirakan sekitar 300.000 orang lari ke perbukitan dan hutan-hutan dekat rumah mereka, dan 250.000 orang dideportasi ke Timor Barat.⁴¹³ Di tengah pembunuhan massal (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa) dan penghancuran 70%-80% bangunan, ratusan ribu orang dikumpulkan oleh milisi dan TNI, dan digiring seperti ternak dari rumah mereka atau tempat-tempat perlindungan, ke dalam truk dan kapal yang menuju Timor Barat. Sebagian orang bersedia pergi ke Timor Barat untuk mengungsi dari kekerasan atau karena mereka pendukung otonomi. Tetapi, bukti yang ada jelas menunjukkan bahwa ribuan orang dipaksa pergi melawan kehendak mereka, di bawah ancaman mati. Pada 31 Desember 2002, sekitar 224.570 orang telah kembali ke Timor-Leste.⁴¹⁴

Dili

424. Tingkat kekerasan di Dili dapat dijelaskan oleh karakternya yang khusus: sebagai markas TNI dan salah satu milisi terkejam di wilayah tersebut, tempat banyak gedung pemerintah, dan kota yang paling padat penduduknya di Timor-Leste sebelum jumlah penduduknya semakin membengkak karena arus masuk pengungsi di bulan-bulan menjelang pemungutan suara.

425. Dili, seperti diperkirakan, menjadi medan utama kekerasan dan penghancuran setelah pemungutan suara. Segera setelah pemungutan suara, ribuan orang mulai mencari perlindungan dari kekerasan milisi, di kompleks Dioses Dili, kediaman Uskup Belo dan ICRC, dan di ratusan tempat lain di seluruh Dili. Pengumuman hasil pemungutan suara oleh UNAMET pada 4 September 1999, disiarkan melalui radio ke seluruh wilayah Timor-Leste, meningkatkan ketegangan dan ketakutan yang dirasakan rakyat Timor.

426. Pada 5 September terdapat sekitar 300 orang di kompleks Camara Eclesiastica, 5.000 di kediaman Uskup Belo, dan 2.000 di kompleks ICRC. Uskup Belo dan direktur Komisi Keadilan dan Perdamaian Dioses Dili, Manuel Abrantes, dilaporkan pergi ke Korem dan meminta TNI bertindak. Mereka meminta pihak militer mengambil kembali kendali atas Dili dari pihak milisi demi melindungi rakyat di rumah Uskup Belo. João Tavares, yang juga hadir dalam pertemuan itu, mengatakan bahwa milisinya tidak akan menyerah sampai Falintil menyerah, dan bahwa milisinya tidak menerima hasil Jajak Pendapat dan siap berperang.⁴¹⁵

.....
* Komisi telah menerima 414 pernyataan yang menggambarkan pemindahan paksa dan 469 pernyataan yang menggambarkan penghancuran harta benda, atau 883 pernyataan. Namun, kalau dikurangi 170 pernyataan yang mencatat pemindahan paksa serta penghancuran harta sekaligus, berarti nomor total laporan adalah 713.

427. Sementara pertemuan ini masih berlangsung, milisi Aitarak menyerang kompleks Camara Eclxiastica Dili, membunuh setidaknya delapan orang dan melukai banyak lainnya. Para anggota milisi bersenjatakan M-16, pistol, senjata api rakitan, dan senjata tajam. Menurut pendakwaan Unit Kejahatan Berat PBB, banyak anggota militer dan polisi Indonesia bersenjata lengkap hadir di sana tapi tidak melakukan tindakan apapun untuk membubarkan milisi atau menghentikan serangan tersebut. Seorang pastor di dalam kompleks menghubungi markas polisi (Polda) untuk melaporkan bahwa mereka sedang diserang. Dia diberitahu bahwa petugas polisi sedang dalam perjalanan ke sana.

428. Orang-orang dipaksa keluar dan dipindahkan ke pelabuhan, sambil dipukuli di perjalanan. Setidaknya 14 lelaki yang terluka parah dipaksa masuk ke truk oleh milisi dan tidak pernah terlihat lagi. Setibanya kelompok dari kompleks ini di pelabuhan, milisi dan polisi memisahkan laki-laki dan perempuan. Para perempuan dibawa oleh polisi ke markas mereka di Comoro. Para laki-laki tetap di pelabuhan, tempat beberapa dari mereka diserang oleh milisi dan TNI, dan dibiarkan saja oleh polisi. Orang-orang yang diketahui sebagai pendukung prokemerdekaan diincar untuk dianiaya.⁴¹⁶

Serangan terhadap kediaman Uskup Belo

429. Keesokan harinya, 6 September, Uskup Belo menelepon Kapolda, Timbul Silaen, dan Danrem, Kolonel Nur Muis untuk meminta perlindungan dan bantuan dalam mengevakuasi ribuan orang dari kediamannya. Keduanya menolak permohonan Uskup Belo. Tapi, seorang Letnan Kolonel TNI yang tidak diketahui identitasnya datang secara pribadi untuk meyakinkan Uskup bahwa TNI bisa melindungi tempat tinggalnya. Dia pergi setelah 15 menit dan tak lama kemudian milisi mulai berdatangan.⁴¹⁷

430. Seorang saksimata melaporkan bahwa sekitar 100 orang milisi datang menggunakan mobil Kijang, sepeda motor, dan truk dan mulai meneriakkan ancaman dan mengitari kompleks tersebut.⁴¹⁸ Para saksimata melaporkan bahwa milisi mulai menembak ke udara dan melempar bom-bom Molotov ke kediaman Uskup hingga membakarnya.⁴¹⁹ Milisi kemudian mendobrak masuk ke kompleks kediaman Uskup dan Biara Canossian di belakang kediaman Uskup, di mana terdapat sekitar 100 orang yang berlindung. Milisi menangkapi para pemuda dan memaksa yang lainnya keluar dari kompleks. Dakwaan Unit Kejahatan Berat menyatakan bahwa TNI dan Brimob juga memasuki kompleks tersebut sambil menembakkan senjatanya, menganiaya penghuninya, dan memerintahkan mereka keluar. Polisi juga turut memerintahkan mereka ke lapangan di depan rumah Uskup; seorang anggota polisi dilaporkan telah menyiramkan bensin ke rumah Uskup dan menyalakannya dengan api. Milisi dan TNI mengeledah rumah uskup untuk memastikan tidak ada lagi pengungsi yang tertinggal.⁴²⁰

431. Pihak milisi dengan semena-mena menginterogasi penduduk sipil dengan hadirnya TNI, Brimob, dan polisi, untuk mencari pendukung kemerdekaan. Sebagian diperintahkan berjalan ke pelabuhan di mana mereka dinaikkan ke kapal menuju Kupang. Yang lainnya dibawa ke kantor desa di Bidau Santana atau ke markas polisi

untuk dinaikkan ke truk, bus mini, atau pesawat AU Indonesia menuju Timor Barat. Mereka diperingatkan kalau mereka tidak menurut, mereka akan dibunuh.⁴²¹

432. Komisi menerima pernyataan mengenai serangan terhadap kediaman Uskup. Herminia Godinho dan keluarganya mencari perlindungan di kediaman Uskup pada 4 September. Dia menceritakan tentang serangan terhadap kediaman uskup oleh milisi Aitarak, termasuk penembakan fatal atas sejumlah penduduk sipil:

*Setelah serangan tersebut, saya dibawa ke kantor Desa Bidau Santana. Yang lainnya dibawa ke pelabuhan Dili. Saya melihat empat orang milisi membawa Mario Correia Fernandes untuk dibunuh.*⁴²²

433. Francisco Tilman melaporkan pada Komisi tentang hilangnya anggota keluarganya yang bernama Vicente da Costa Carlos Tilman. Dia salah satu pengungsi di kediaman Uskup tapi tidak pernah terlihat lagi sejak serangan pada 6 September itu.⁴²³ Saudara laki-laki Mario Correia Fernandes, Fernando da Silva, juga melaporkan bahwa Mario menghilang. Mereka mencari perlindungan di rumah Uskup setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat. Setelah serangan tersebut mereka dipaksa pindah ke Bidau Santana. Di sana, pada tengah malam, orang-orang bertopeng membawa pergi saudaranya, Mario. Dia tidak pernah terlihat lagi sejak itu; dia meninggalkan seorang istri dan tiga anak.⁴²⁴ Armindo Moniz menceritakan bagaimana anaknya, Etelvina Martins, berumur 13 tahun, jatuh sakit karena ketakutan dan *shock* ketika milisi Aitarak memulai serangannya terhadap kediaman Uskup. Armindo dan keluarganya dideportasi paksa ke Pulau Alor (Nusa Tenggara Timur, Indonesia), tempat sang anak akhirnya meninggal karena penyakit.⁴²⁵

434. Sekitar waktu yang bersamaan dengan penyerangan atas kediaman Uskup, kompleks ICRC juga dikepung oleh milisi Aitarak bersenjatakan senjata otomatis, pistol rakitan, dan senjata tajam. Setidaknya dua orang terbunuh; para pengungsi lainnya dipaksa ke pelabuhan atau ke markas polisi untuk dideportasi.⁴²⁶

Kesaksian dari anggota milisi

435. Di Metinaro (Dili), dalam sebuah operasi skala besar yang dikoordinasi oleh Komandan Koramil, milisi Aitarak melancarkan deportasi ribuan orang ke Timor Barat. Orlando de Meio Maia adalah pemimpin milisi Aitarak di Metinaro yang berpartisipasi dalam kekerasan itu. Dalam pernyataannya kepada Komisi, dia bercerita tentang pertemuan yang diadakan pada 5 September oleh Komandan Koramil, F13, yang juga dihadiri oleh para anggota TNI. Selama berlangsungnya pertemuan ini, F13 memerintahkan Orlando dan pegawai negeri sipil lainnya untuk menjadi milisi Aitarak, dan mempersenjatai mereka dengan senjata api. Pada hari yang sama, pasukan bersenjata ini melakukan penyerangan. Mereka membakar rumah pemimpin CNRT lokal dan, pada hari berikutnya, pemimpin lokal yang bernama Antonio Saldana ditembak oleh milisi di depan markas militer Metinaro. Orlando dan keluarganya dibawa ke Atambua oleh TNI pada 10 September 1999.⁴²⁷

436. Seorang pria dari Timor mengatakan kepada Komisi bahwa dia diperintahkan membakar dan membunuh. Dia menyadari bahwa jika dia tidak melakukan hal ini, milisi Besi Merah Putih dari Liquiça akan menyerangnya. Dia bersama rekannya membakar rumah, kapal, dan jaring di suatu kampung di Liquiça, dan membakar satu rumah di kampung lainnya. Belakangan mereka dideportasi ke Atambua.⁴²⁸

437. Komisi telah menerima laporan bahwa Mateus de Carvalho, kepala Desa Hera (dan juga komandan milisi Aitarak), melepaskan tembakan dan mengancam akan mendeportasi penduduk sipil ke Kupang (Timor Barat).⁴²⁹ Komisi diberitahu bahwa pada 6 September seorang wanita dari Timor pergi ke kantor polisi di Metinaro, karena diperintahkan oleh tentara-tentara TNI yang berteriak: “Yang tidak mau pergi akan mati.” Pada awalnya para tentara mengatakan bahwa hanya pegawai negeri sipil dan tentara yang akan pergi ke Kupang selama tiga bulan. Meskipun demikian, setelah mendengar tentang pembunuhan terhadap kepala sekolah lokal (Antoninho), perempuan menjadi sangat takut dan setuju pergi ke Kupang.⁴³⁰

438. Deportasi besar-besaran ini tidak berarti bahwa penderitaan dan kematian terbatas pada kamp-kamp pengungsi di Timor Barat. Madalena da Costa Alexo mengatakan kepada Komisi bahwa:

Pada tanggal 7 September ketika kami dipaksa untuk pindah ke Kupang, saya harus meninggalkan ibu saya yang cacat di rumah adat kami di Metinaro. Ibu saya meninggal ketika kami berada di Kupang. Dia sangat terpukul akibat situasi yang mengingatkannya pada perang saudara tahun 1975.⁴³¹

439. Pada saat yang sama ketika ratusan orang dinaikkan ke truk-truk untuk dibawa ke pelabuhan Dili, beberapa orang melarikan diri dari Koramil Metinaro tempat mereka ditahan, dipimpin oleh para pemimpin prokemerdekaan. Mereka lari ke gunung-gunung sementara rumah dan desa mereka terbakar.⁴³²

440. Selama hari-hari berikutnya, kelompok milisi bersenjata terus merajalela di Dili, menyerang penduduk sipil yang tidak bersenjata dan membawa mereka dari tempat-tempat pengungsian ke tempat pengumpulan pengungsi, di mana mereka kemudian dimasukkan ke truk atau kapal dan dideportasi ke Timor Barat. Pos pemeriksaan milisi didirikan di seluruh kota dan di sepanjang jalan keluar Dili agar penduduk tidak dapat pergi ke mana-mana selain Timor Barat. Dili menjadi kota mati karena sebagian besar penghuninya telah dideportasi ke Timor Barat atau lari ke bukit-bukit terdekat.⁴³³ Hanya segelintir orang yang menetap di kota, bersembunyi di antara reruntuhan yang terbakar.

441. Tabel berikut berisi pernyataan-pernyataan lebih lanjut dari penghuni Dili yang mengalami kekerasan, deportasi, dan pemindahan pada September 1999.

**Tabel 14: Deportasi dan pemindahan Distrik Dili
(milisi Aitarak dan Tim Makikit)**

| HRVD | Nama dan Lokasi | Ringkasan |
|-------|--|---|
| 03726 | Brigida Freitas Correia, Comoro, Dili | Pada 1 September milisi datang ke rumah saya mencari suami saya yang sedang tidak ada di rumah. Rumah kami dihancurkan. Mereka membawa saya dan anak-anak saya ke Pos II Aitarak. Di sana kami diancam dan kemudian dibawa ke Tropical. Seorang anggota Tim Makikit dari Ossu (Viqueque) turut campur dan menyelamatkan kami. Kami dibawa ke Atambua di mana kami tinggal selama dua bulan. |
| 05705 | Domingas da Silva Andrade], Camea, Dili | Keluarga saya dipaksa pergi oleh milisi Aitarak dari Pos 13 ke Kupang. Kami berada di sana sampai bulan April 2003. |
| 05744 | Filomeno Matos Guterres, Becora, Dili | Setelah Jajak Pendapat, milisi dan TNI mulai menyerang masyarakat. Saya membawa keluarga saya dan lari ke Darlau (Aileu). Kami kembali pada 22 September 1999 ketika situasi sudah membaik, tapi hanya mendapati rumah kami yang sudah hangus rata dengan tanah. |
| 08117 | Florentina Rodrigues, Santa Cruz, Dili | Tanggal 7 September, milisi Aitarak membakar dan menyerang rumah saya. Saya lari ke Dare dan baru kembali setelah Interfet tiba. |
| 00342 | Cosmos Olin, Comoro, Dili | Tanggal 3 September milisi Aitarak yang mengenakan pakaian hitam-hitam datang ke daerah kami. Saya mengenali salah seorang milisi itu yang adalah teman saya. Dia membolehkan saya pergi dan saya lari ke kamp gereja Don Bosco di Comoro. Lebih dari 1.000 orang sudah berada di sana. Setelah empat hari, milisi Aitarak datang dan memerintahkan kami untuk pindah ke museum. Teman saya memaksa saya untuk bergabung dengan Aitarak dan ikut dalam operasi-operasi di Manatuto dan Aileu. Ketika saya kembali, saya membawa istri dan bayi kami yang berumur dua bulan, ke Atambua. |
| 05725 | Antonio Henriques Soares, Bidau Santana, Dili | Tanggal 4 September setelah pengumuman hasil pemilihan, milisi Aitarak lokal dari Pos 12 memerintahkan saya dan keluarga saya pergi ke markas militer Distrik Dili (Kodim). Belakangan kami dipindahkan lagi ke Hotel Mahkota. Pada 27 September kami kembali ke rumah kami yang sudah menjadi abu. |
| 00150 | Gaspar Mesquita Mendonca, Duyung, Metinaro, Dili | Tanggal 5 September milisi yang dibentuk oleh TNI mulai mengatur operasi terhadap orang-orang yang prokemerdekaan. Rumah kami dibakar, jadi kami pindah ke Besahe di Kampung Baru. Pada 14 September kelompok milisi yang sama yang dipimpin komandan lokal yang sama juga membakar tempat ini. |

| | | |
|-------|--|---|
| 00143 | Manuel Mendoca, Besahe, Metinaro, Dili | Tanggal 6 September saya ditahan bersama dengan tiga laki-laki lainnya oleh milisi Aitarak di Besahe. Saya dipukuli dengan senapan buatan tangan dan kemudian ditembak, tapi pelurunya meleset. Kemudian kami dibawa ke pos komando militer subdistrik (Koramil). Di sana kami diperintahkan untuk menulis nama kami dalam sebuah daftar, bersama dengan semua anggota keluarga kami, untuk dibawa ke Atambua. Kami berhasil lolos. |
| 05720 | Manuel Sarmiento, Camea, Dili | Setelah pengumuman hasil pemilihan, saya dan keluarga saya mencari perlindungan di Kaisabe karena kami takut terhadap ancaman-ancaman BRTT dan milisi Aitarak dari Hera, Dili. Ketika kami pulang, rumah kami sudah hangus dan semua ternak kami sudah hilang. |
| 00153 | Manuel Maria de Carvalho, Duyung, Metinaro, Dili | Pada tanggal 4 September kepala Desa Hera, yang juga komandan lokal Aitarak, memerintahkan anakbuahnya untuk memaksa saya dan keluarga saya pergi ke Kupang. Kami dibawa ke pelabuhan Dili dan dimasukkan ke kapal. Kami tinggal di kamp pengungsi di Noelbaki, Kupang, dan kembali pada tanggal 23 November 1999. |

Bobonaro

442. Lebih daripada distrik-distrik barat lainnya, Bobonaro menjadi pusat kekuatan pro-otonomi dan merupakan tempat kegiatan milisi yang ekstrem pada September 1999. Reaksi terhadap staf lokal UNAMET sudah dimulai bahkan sebelum pengumuman hasil Jajak Pendapat. Pada 2 September dua staf lokal UNAMET, Ruben Barros dan Domingos Pereira, dibunuh oleh milisi Dadurus Merah Putih (DMP) dan TNI. Pada hari yang sama staf UNAMET pun dievakuasi. Milisi mulai membakar dan merampok kantor-kantor UNAMET dan rumah-rumah di sekitarnya.⁴³⁴ Agapito Soares mengatakan kepada Komisi bahwa milisi DMP menyerang kantor CNRT Maliana, dan dalam kejadian ini seorang pendukung CNRT yang bernama Mateus Breok ditembak mati. Agapito bersama dengan yang lainnya lari ke Gunung Loelaku, mencari perlindungan pada tentara-tentara Falintil.⁴³⁵

443. Sampai pada hari diumumkannya hasil Jajak Pendapat, ribuan orang telah meninggalkan rumah mereka mencari keselamatan. TNI dan milisi benar-benar menguasai seluruh Kota Maliana. Orang-orang yang masih berada di Maliana dipaksa pergi ke kantor polisi karena TNI dan milisi mengancam akan membunuh semua pendukung kemerdekaan. Ketika markas Polres sudah penuh, anggota-anggota milisi DMP dan TNI memaksa penduduk pergi dari rumah mereka ke rumah sakit atau ke gelanggang olah raga (GOR) Maliana di dekat situ. Akhirnya milisi membawa semua orang yang mereka temukan untuk menyeberangi perbatasan menuju kamp-kamp pengungsi di Timor Barat.

444. Contohnya, Laurentina Amaral dan suaminya, Florindo da Conceição, dibawa ke Hakesak (Timor Barat) oleh milisi DMP pada 8 September.⁴³⁶ Pada hari yang sama Jaime dos Santos, Felix Laku, dan Luis de Jesus bersembunyi di rumah seorang anggota TNI ketika mereka diserang oleh milisi DMP, yang beberapa anggotanya mengenakan seragam “ninja” hitam-hitam. Mereka dipaksa pergi ke sebuah daerah yang bernama Turisca di Timor Barat.⁴³⁷ Tapi, beberapa orang dapat melarikan diri dari milisi. Julião Marques lari dari rumahnya dan bersembunyi di Desa Tapo sehari setelah pemilihan. Pada 7 September, milisi DMP dan tentara dari Kodim Maliana menyerang dirinya dan komunitas di situ. Mereka kemudian lari ke hutan Lepgeun, Tapo Memo (Maliana, Bobonaro).⁴³⁸

Pembantaian di Kantor Polisi Maliana

445. Hingga 9 September, kurang-lebih 1.000 orang pengungsi berada di markas polisi Maliana. Sebagian dari mereka sudah berada di sana selama beberapa hari. Sekitar pukul 18.00, TNI dan milisi, dengan mengenakan topeng atau ikat kepala merah-putih, menyerang dengan membawa pisau, parang, dan pedang. Para saksimata menceritakan bagaimana para pemimpin prokemerdekaan dipisahkan dan ditikam hingga tewas. Beberapa orang mencari perlindungan pada Brimob tapi tanpa hasil. Beberapa orang dibunuh di depan keluarganya, dan beberapa dibunuh ketika berusaha melarikan diri. Sebagian lagi terbakar hangus. Penduduk terpencar-pencar: ada yang bersembunyi di pohon-pohon, ada yang memanjat ke plafon gedung, dan yang lainnya bersembunyi di dalam lemari atau gulungan matras.⁴³⁹ Pada saat serangan terjadi, di markas tersebut terdapat kurang-lebih 435 orang polisi termasuk polisi lokal, brigade mobil, dan Kontingen Lorosae, yang telah ditugaskan mengamankan pemilihan suara.⁴⁴⁰ Semua perwira polisi, kecuali delapan orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan, dipersenjatai, tapi tidak satupun peluru ditembakkan oleh mereka untuk mencegah serangan itu. Para perwira polisi tidak mengambil langkah apapun untuk melindungi para pengungsi, dan bahkan mencegah mereka yang mencoba melarikan diri dari amukan itu.⁴⁴¹ Serangan itu berlangsung selama tiga jam dan setelah itu mayat-mayat diangkut dengan truk dan dikirim ke Batugade, untuk dibuang ke laut. Tidak diketahui pasti berapa orang yang mati.

446. Pada malam itu para pendukung kemerdekaan yang selamat lari ke bukit-bukit. Keesokan harinya milisi DMP dari Ritabou (Malian, Bobonaro) membawa 13 orang yang selamat ke sebuah kubangan di Mulau, Ritabou (Malian, Bobonaro). Semua ditembak dan ditikam hingga tewas.⁴⁴² (Lihat Bab 7.2 Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.) Salah satu dari mayat-mayat itu terdampar di pantai dan teridentifikasi dengan pasti. Para korban selamat yang berada di markas polisi dan rumah sakit yang tidak bisa lari ke bukit-bukit, dipaksa pergi ke Timor Barat.⁴⁴³

447. Setelah terjadi pembantaian, para anggota TNI dan milisi mulai menyisir kota. Orang-orang dipaksa berjalan ke Timor Barat atau dipaksa membayar jika mereka dikirim dengan truk. TNI memaksa orang-orang naik ke truk dengan ancaman akan menjatuhkan bom di Maliana untuk menghancurkan desa di gunung-gunung, atau melancarkan perang besar-besaran.⁴⁴⁴

448. Pada saat yang sama mereka yang lari ke hutan untuk menghindari kekerasan dikejar oleh milisi, digiring kembali ke kota, dan dideportasi dengan paksa ke kamp-kamp pengungsi di Timor Barat. Di kamp-kamp ini mereka tetap menanggung kekerasan dan pemerasan oleh milisi. Orang-orang dari Desa Saburai (Maliana, Bobonaro) menceritakan penangkapan mereka ketika mereka mencoba lari ke hutan. Rumah mereka dibakar dan mereka dibawa ke gelanggang olahraga.

*TNI bersama milisi [DMP] di bawah pemimpin mereka, F15, seorang Timor, melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang lari ke hutan di kaki gunung dan membawa mereka turun kembali. Pada tanggal 8 September pagi hari [mereka] memaksa masyarakat agar turun ke Maliana dengan membakar rumah-rumah penduduk... Pada tanggal 10 September seluruh masyarakat yang dikonsentrasikan di GOR [stadion] Maliana diungsikan ke Turiskai, Timor Barat.*⁴⁴⁵

449. Pada saat penyerangan di pangkalan polisi, kelompok-kelompok milisi lain di Distrik Bobonaro, antara lain Halilintar, Armui (Atabae), Firmi Merah Putih (Balibó), Guntur (Cailaco), Hametin Merah Putih (Bobonaro), dan Kaer Metin Merah Putih (Lolotoe), juga membakari rumah-rumah dan menggiring orang-orang ke Timor Barat.⁴⁴⁶ Di Distrik Bobonaro terdapat sekitar 13.500 rumah yang tidak bisa ditinggali lagi. Hanya sedikit desa, biasanya di daerah yang dikuasai Falintil, yang tidak hancur samasekali. Hampir semua gedung pemerintah, sekolah, dan klinik juga dihancurkan dan benar-benar dijarah isinya. Hanya beberapa gereja yang tidak tersentuh. Sekitar 30.000-40.000 orang dideportasi. Sejumlah besar penduduk dari Desa Balibó, Atabae, Soilesó, Oeleo, Malilait, dan Kotabot belum kembali.

Covalima

450. Setelah kekerasan yang terjadi pada masa menjelang pemungutan suara, Covalima menjadi tempat utama terjadinya kekerasan, pemindahan, dan penghancuran pasca-Jajak Pendapat. Keterangan para saksi menunjukkan bahwa milisi Laksaur bersama TNI dan penguasa sipil mengatur deportasi semua penduduk sipil yang mereka temui.⁴⁴⁷ Pada 6-7 September, komandan Laksaur, Olivio Moruk, berkendara keliling Suai dan dengan menggunakan pengeras suara mengumumkan bahwa jika masih ada penduduk yang tinggal setelah 9 September, mereka semua akan dibunuh. Akibatnya, penduduk yang ketakutan itu mengumpulkan barang-barang mereka dan menunggu kendaraan di sepanjang jalan-jalan utama. Pernyataan para saksi menjelaskan bagaimana bupati F17 mengatur lebih daripada 30 truk untuk mendeportasi penduduk.⁴⁴⁸ Beberapa anggota masyarakat melaporkan bahwa mereka dipaksa membayar Rp800.000 untuk biaya deportasi paksa ini.⁴⁴⁹

Pembantaian di Gereja Suai

451. Komisi menerima banyak sekali kesaksian mengenai pembunuhan dan pemindahan orang-orang yang mengungsi di Gereja Suai.⁴⁵⁰ Salah seorang saksi mata dengan lugas menceritakan penyerangan 6 September:

Sejak Juli 1999, situasi di Suai sangat tidak aman. Suami saya, yang adalah anggota CNRT, lari ke hutan. Orang-orang CNRT dicari Laksaur, maka keluarga saya dan saya lari ke gereja Suai. Pada tanggal 6 September 1999, kira-kira jam 2 siang, milisi Laksaur menyerang gereja Suai. Selama serangan saya lihat tentara TNI berpakaian sipil, memakai senjata rakitan, parang, dan pedang. Mereka membunuh pastor paroki. Saya lihat bupati Suai, F17, dan [komandan] Koramil Salele, F18, dan laki-laki F19 berjalan bersama, tepat sebelum serangan. Saya melihat orang-orang diserang dengan parang dan ditembak. Kami disuruh berkumpul dan tidak bergerak, jika tidak ingin dibunuh. Kira-kira pukul tiga kurang sepuluh menit, keluarga saya dan saya dibawa ke markas Kodim di Suai. Pada tanggal 7 September, sekitar tengah malam, anggota milisi F20, orang Timor, yang juga seorang babinsa di Suai Loro, bagian dari Koramil, datang dan mengancam saya. Dia memerkosa saya, dan saya tidak dapat berbuat apa-apa karena saya ketakutan.⁴⁵¹

452. Setelah pembantaian di Gereja Ave Maria di Suai, para anggota milisi Laksaur dan TNI memaksa para korban yang selamat pergi ke Kodim Suai dan gedung SMP 2. Dengan dijaga oleh milisi dan TNI, mereka ditahan selama delapan hari sebelum kemudian dibawa ke Timor Barat, di mana kekerasan terus berlanjut. Ketika ditahan di gedung sekolah dan Kodim, dan belakangan di kamp-kamp di Timor Barat, beberapa perempuan berkali-kali diperkosa oleh milisi (lihat Bab 7.7: Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual). Kekerasan semacam ini digambarkan dalam dua pernyataan di bawah ini:

Kami dibawa ke Kodim. Di sana, setiap malam kami selalu diganggu. Mereka masuk dan membawa pergi perempuan-perempuan di malam hari. Mereka membawa senter menyinari saat orang-orang tidur untuk kemudian memaksa perempuan untuk keluar bersama mereka. Kami tidak diizinkan membawa barang kami. Kami tinggal di Kodim hingga tanggal 14 September 1999, dan kemudian kami dibawa ke Betun. Malam itu, kira-kira pukul 6.00 atau 7.00 pagi, sebuah mobil hardtop dengan empat orang, dua di antaranya bersenjata, membawa saya ke hutan. Saya diperkosa oleh dua orang, bergantian. Mereka adalah milisi Laksaur F21, seorang sopir taksi, dan F22, laki-laki dari Fatumean. Saya tidak mengenali dua orang yang lain, karena saat itu terlalu gelap dan saya ketakutan.⁴⁵²

453. Korban lain memberitahu Komisi:

Kemudian kami dipaksa dan dibawa ke gedung SMP 2. Di sana kami dicaci-maki. Kami tidak diberi makanan apapun selama tiga hari. Kami lapar dan membagikan potongan jagung bakar di antara sesama pengungsi. Kami memunguti remah-remah yang terjatuh karena kami sangat lapar. Malam hari mereka mengganggu kami, terutama kaum perempuan. Kami sangat ketakutan sehingga tidak bisa tidur. Mereka mematikan listrik. Kami menyalakan lilin, tetapi dipadamkan milisi. Lalu milisi mengambil senter dan menyoroti kami yang perempuan. Pada malam hari milisi datang dengan senjata dan pedang, dan mereka akan membawa pergi perempuan dan gadis-gadis muda.⁴⁵³

454. Di bawah perintah komandan mereka, F5 dan F24, orang Timor-Leste, anggota milisi Laksaur pergi ke hutan-hutan di distrik Covalima untuk membunuh siapapun yang bersembunyi di sana untuk menghindari deportasi.⁴⁵⁴ Di antara mereka yang lari adalah penduduk desa dari Nikir, Raihun (Tilomar, Covalima), yang diserang oleh milisi Laksaur dan seorang anggota TNI pada 25 September di Hutan Wea. Bersenjatakan senapan otomatis dan parang, milisi mulai menembaki mereka. Mereka membunuh Januario Maya, Damião Ximenes, dan Titua Mali, serta mencederai Juliana Moniz. Milisi menangkap Juliana bersama tujuh orang lainnya yang tidak berhasil melarikan diri. Mereka dideportasi ke Timor Barat.⁴⁵⁵ Yang lainnya, seperti Eugenio de Deus, berhasil melarikan diri ke hutan.⁴⁵⁶

455. Tabel berikut ini berisi beberapa pernyataan yang diterima oleh Komisi, yang menceritakan tentang kekerasan dan deportasi serta pemindahan paksa di seluruh distrik.

| Tabel 15: Deportasi dan pemindahan Distrik Covalima (milisi Laksaur) | | |
|--|-------------------------------|--|
| HRVD | Nama dan Lokasi | Ringkasan |
| 03624 | Aquelina Cardoso, Debos, Suai | Saat itu saya adalah pengungsi di Gereja Suai ketika milisi Laksaur menyerang kami pada 6 September. Saya melihat milisi Timor F25 dan F26 menembak mati sepuluh orang, termasuk perempuan yang bernama Matilde yang sedang mengandung tujuh bulan. Kami dipindahkan ke SMP lokal (SMP 2). Di sekolah itu, saya dipukuli dan ditendang. Suatu hari saya melihat dua milisi Laksaur yang juga polisi, memerkosanya empat perempuan. Kemudian keempat perempuan itu dibawa ke Atambua. |

| | | |
|-------|------------------------------|--|
| 05162 | Manuela Cardoso, Fatumean | Suami saya ditahan oleh milisi Laksaur di pos mereka di Bubur Fehan pada 2 September. Dua hari kemudian mereka membunuhnya dan membuang mayatnya di Timor Barat. Saya sangat takut dan lari ke Koramil di Tilomar. Saya dan keluarga saya dibawa ke Timor Barat. Di sana saya masih diancam oleh milisi Laksaur. |
| 08587 | Adao Mali, Camanasa Suai | Bersama dengan dua orang teman, saya lari ke Gunung Fohorau untuk menghindari pembunuhan dan pembakaran yang dilakukan milisi Laksaur terhadap orang-orang di Camanasa (Suai, Covalima). Setelah empat hari di gunung, kami diserang oleh TNI dan milisi yang membawa senjata-senjata otomatis. Dua orang teman saya mati dalam tembak-menembak itu. Sore itu saya kembali dengan anggota komunitas saya yang lainnya dan hanya menemukan jasad mereka. |
| 01302 | Pedro de Jesus, Fatululik | Tanggal 4 September, milisi Laksaur menembaki saya di depan gereja kecil (capela) di Fatuloro. Saya lari ke Beco di mana seorang anggota milisi dan polisi Kontingen Lorosae menyuruh saya menyeberangi perbatasan, jika tidak saya akan ditembak mati. |
| 02025 | Carlito da Costa, Fatululika | Pada 5 September, saya lari ke hutan dengan anggota komunitas saya yang lainnya. Dalam perjalanan, milisi Laksaur menembak mati salah satu pemuda di kelompok kami yang bernama Domingos Taiasa. Dia masih berumur 17 tahun. |
| 02034 | Abilio Gusmão, Hopilat, Suai | Saya sudah lari ke Gereja Suai pada 27 Maret 1999, tetapi pada bulan April saya pindah ke Hasain Belekasak karena situasi di gereja terlalu sulit. Saya diserang oleh milisi pada bulan itu, dan satu bulan kemudian milisi Laksaur dan tentara-tentara dari Kodim Suai membakar rumah saya. Pada 1 Juli, saya mengungsi lagi ke Gereja Suai. Kami lari ke gunung-gunung tanggal 5 September, takut terhadap serangan milisi dan TNI. Keluarga saya dideportasikan dengan paksa ke Atambua oleh Laksaur dan TNI. |
| 08485 | Madelena de Jesus, Suai | Pada 5 September saya ditangkap di rumah saya di Babu Lakunak oleh 10 milisi Laksaur. Mereka juga mengambil motor saya. Saya ditahan di pos mereka di Leogore selama satu malam. Esok harinya, saya dan keluarga saya dipindahkan ke Timor Barat. |
| 01266 | Lucia Guterres, Fatululik | Saya mengungsi di Gereja Suai ketika kami diserang pada 6 September. Empat milisi Laksaur membawa saya dan seorang perempuan lain keluar dari gereja itu. Tepat di depan gedung itu, saya melihat seorang perempuan bernama Jacinta Gusmão jatuh setelah lehernya dipotong oleh milisi dengan parang. Kami dinaikkan ke sebuah truk yang membawa kami ke markas militer distrik (Kodim) Suai. Kami ditahan di sana selama enam hari. Pada 12 September kami dibawa ke Atambua. |

Liquiça

456. Distrik Liquiça juga terpukul keras oleh kekerasan pascapemilihan. Milisi Besi Merah Putih (BMP) mendeportasi paksa ribuan orang ke kota pelabuhan Atapupu, yang terletak kira-kira satu jam perjalanan dari Atambua (NTT/Timor Barat, Indonesia).

457. Pada 31 Agustus, Armindo da Silva Cloria ditangkap dan dipukuli oleh milisi Halilintar, ketika dia berusaha membawakan makanan kepada tentara Falintil di hutan. Dia dibawa ke pos BMP di Batubetilul, Vatovoru, tempat dia kemudian ditahan dan disiksa selama satu hari. Esoknya, seorang biarawati setempat, Maria Lourdes menegosiasikan pembebasannya. Armindo tinggal dengan biarawati ini di sebuah kamp pengungsi di Atabae (Bobonaro) dan kemudian dideportasi ke Atambua (NTT/ Timor Barat, Indonesia).⁴⁵⁷

458. Seorang perempuan Timor menceritakan pembunuhan suaminya pada 7 September oleh lebih daripada enam orang milisi Besi Merah Putih (BMP). Dengan dipimpin oleh seorang laki-laki, F39, milisi itu menembak punggung suaminya kira-kira delapan kali. Perempuan ini lari ke Bazartete.⁴⁵⁸ Kejadian yang serupa dialami oleh seorang perempuan lain, yang mengatakan kepada Komisi bahwa pada 7 September, milisi BMP yang sedang melakukan operasi di Leorema membunuh suaminya. Suaminya sedang berdiri di depan rumah mereka ketika milisi BMP datang dan menuduhnya memberikan makanan kepada Falintil, dan menembaknya di tempat. Perempuan ini lari ke Ermetalau tapi tertangkap oleh milisi BMP. Dia pun dibawa ke Bazartete, kemudian dideportasi ke Timor Barat.⁴⁵⁹ Milisi BMP melakukan deportasi-deportasi ini selama kurang-lebih dua minggu. Pada 19 September 1999, milisi BMP memburu sebuah keluarga yang telah menghindari deportasi dengan bersembunyi di daerah gunung-gunung di Ailetehei. Mariano de Jesus ditembak di pundak sehingga harus dibawa oleh ibunya kembali ke Desa Lauhata untuk mendapatkan perawatan.⁴⁶⁰

459. Amelia dos Santos menjadi janda setelah serangan yang terjadi di gereja Liquiça pada 6 April 1999. Dia dan suaminya, Victor Manuel da Conceição, ketika itu mengungsi di gereja tersebut. Milisi BMP memenggal kepala suaminya di pintu gereja. Setelah itu Amelia terus menanggung berbagai pelanggaran dan, di bawah ancaman, dia membayar seorang milisi Besi Merah Putih untuk mendeportasikan dia dan anak-anaknya ke Timor Barat:

Menjelang hari pemungutan suara, bupati Liquiça, Leoneto, menulis surat perintah penahanan saya. Saya ditahan di kantor polisi Maumeta selama dua hari. Lalu saya dipindahkan ke Koramil. Mereka berkata kepada saya, "Jika otonomi menang, kamu bisa jadi pembantu untuk istri-istri kami." Ketika kami dengar pihak prokemerdekaan menang, milisi datang ke Koramil mengancam saya, "Kamu harus mati karena kamu pilih merdeka." Saya sangat ketakutan. Saya bayar Rp100.000 ke orang milisi untuk membawa kami ke Atambua. Di Atambua saya bertemu milisi yang berkata bahwa setelah suami saya terbunuh, mayatnya akan dimasukkan ke dalam karung goni. Mereka menelanjanginya dulu karena dia berutang pakaiannya pada rakyat Indonesia.⁴⁶¹

460. Bagi mereka yang dapat melarikan diri dari pendeportasian ke Timor Barat, bertahan hidup di gunung-gunung sangatlah sulit. Mario dos Santos mengatakan kepada Komisi bagaimana dia, istri, dan anaknya lari ke gunung-gunung di Asaleten (Suai, Covalima). Anaknya yang baru berumur tujuh tahun, Germano dos Santos, meninggal karena kekurangan makanan ketika mereka di hutan.⁴⁶²

Distrik bagian tengah

461. Walaupun distrik-distrik barat terkena dampak paling berat, distrik-distrik tengah seperti Aileu, Ainaro, Ermera, dan Manufahi, tidak luput dari penghancuran dan deportasi pasca-Jajak Pendapat. Desa-desa di Aileu dihancurkan dengan cara yang sistematis. Dimulai pada 4 September, desa-desa berikut ini dihancurkan pada hari-hari yang berurutan: Mantane (4 September), Aissirimou (5 September), Aeloi Malere (6 September), Saboria (7 September), Sukuliurai (8 September), dan Hoholu (9 September). Menurut laporan, TNI dan anggota-anggota milisi berkeliling menggunakan kendaraan selama sehari penuh menembaki ternak-ternak. Kemudian milisi AHI (Aku Hidup dengan Integrasi) menggiring orang di dusun-dusun kecil dekat jalan utama, termasuk Fatubossa, Hoholete, dan Likilaukana, dan memaksa mereka pergi ke Kota Aileu. Dari situ mereka kemudian dimuat dalam kendaraan menuju Atambua.⁴⁶³

462. Komisi menerima banyak pernyataan dari Talitu (Laulara, Aileu) yang menceritakan berbagai tindak kekerasan dan pendeportasian. Misalnya, Francisco Carvalho menceritakan tentang pembakaran rumahnya yang dilakukan oleh milisi AHI dan kemudian pendeportasian dirinya dan keluarganya ke Timor Barat.⁴⁶⁴ Clementino Araújo dan penduduk Fahiria (Aileu, Aileu) dipindahkan secara paksa ke Kota Aileu pada 4 September oleh milisi AHI setelah rumah mereka di Fahiria dibakar dan ternak mereka dibunuh.⁴⁶⁵ Domingos de Araújo mengatakan kepada Komisi bahwa pada 5 September dia dibawa dari rumahnya di Aissirimou ke Kota Aileu. Ketika dia dan penduduk Aissirimou meninggalkan desa mereka, milisi AHI membakar rumah mereka dan berpesta menyantap ternak mereka. Kemudian mereka dibawa ke markas Polda di Dili sebelum diangkut dengan truk menuju Atambua.⁴⁶⁶

463. Beberapa orang lain berhasil lolos dari deportasi. Eduardo Moniz dan keluarganya lari ke Motakuak pada 2 September setelah rumahnya diserang oleh milisi AHI. Ketika mereka kembali, yaitu setelah Interfet tiba, mereka mendapati rumah mereka sudah hancur rata dengan tanah dan semua harta-benda mereka dihancurkan.⁴⁶⁷

464. Diperkirakan sekitar 13.000 penduduk sipil di Distrik Ainaro diperintahkan meninggalkan rumah mereka antara 4 September dan 23 September. Milisi Mahidi menyerang desa-desa, membakar rumah, dan memblokir semua jalan keluar. Di Maubisse milisi pertama-tama merampas dan membunuh ternak milik penduduk yang telah mengungsi ke bukit-bukit. Kemudian mereka mulai membakari rumah-rumah. Di Hato Builico, penduduk diperintahkan keluar dari rumah mereka, yang kemudian dibakar di depan mata mereka. Orang dari desa-desa sekitarnya dikumpulkan dekat gereja di Kota Ainaro dan dipaksa naik ke truk-truk menuju Timor Barat. Milisipun mulai membakari rumah-rumah sebelum mereka juga berangkat ke Timor Barat sekitar 22 September 1999.⁴⁶⁸

465. Prisca da Conceição menceritakan pembakaran rumahnya dan suaminya yang ditembak mati pada 4 September. Diapun lari ke pos polisi untuk mencari perlindungan. Selama enam hari tinggal di sana, dia terus-menerus dilecehkan dan diancam oleh milisi yang membawa senjata tradisional. Pada 11 September, semua orang yang berlindung di pos polisi dikirim ke Betun di Timor Barat. Di Betun, mereka terus-menerus diancam oleh milisi Mahidi yang mencoba mencegah mereka agar tidak bisa kembali. Prisca baru bisa kembali ke Ainaro pada 22 November 1999.⁴⁶⁹

466. Pernyataan-pernyataan yang diterima oleh Komisi mengungkapkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh milisi Mahidi terhadap penduduk sipil yang tidak berdaya. Teresa da Silva dari Desa Lepo, mengatakan kepada Komisi bahwa dia menyaksikan 15 anggota Mahidi, termasuk seorang anggota polisi yang dia kenali, menyerang desanya pada 5 September 1999. Mereka membakari rumah-rumah, termasuk miliknya, dan menembakkan senjata mereka dengan sembarangan. André da Sena lari ke hutan di daerah Lour di Subdistrik Zumalai (Covalima).⁴⁷⁰ Pada 7 September, sedikitnya 50 milisi Mahidi menyerang Desa Fatulebo, membakari rumah-rumah. Seorang lelaki Timor ditembak di kaki, tetapi berhasil melarikan diri ke hutan bersama orang-orang lainnya.⁴⁷¹ Isabel dos Santos diberitahu oleh seorang anggota milisi Mahidi bahwa suaminya dibunuh pada 7 September 1999. Namun, dia menemukan suaminya masih hidup di pos TNI dengan luka tusukan bayonet yang menganga di paha dan punggungnya. Mereka berhasil melarikan diri dan mengungsi di Dare (Dili).⁴⁷²

467. Komisi menerima kesaksian mengenai serangan milisi Mahidi terhadap Kampung Maununo (Ainaro, Ainaro) pada 23 September. Milisi tersebut membunuh orang dan membakar rumah-rumah di kampung itu, dan mengirim paksa 56 penduduk yang selamat ke Betun, Timor Barat. Regina Beanto menceritakan peristiwa itu:

Karena para milisi membawa senjata tajam, penduduk sipil takut dan menurut saja. Jika tidak mereka akan ditembak mati, hidup mereka direnggut. Hanya dengan pakaian di badan mereka, orang-orang mengikuti milisi-milisi berjalan. Anak-anak tak berdosa, perempuan-perempuan hamil, perempuan dan laki-laki tua, semuanya diancam. [Mereka] harus menyeberangi sungai berjalan kaki, orang-orang haus dan lapar. Mereka tidak punya energi untuk berjalan. Kira-kira ada 50 milisi terlibat.

[Dia menggambarkan bagaimana anggota milisi mengancam kelompok ini dengan granat, lalu menembak mati ibunya di depan matanya.]

Seorang milisi menarik tangan saya dan memaksa saya ke truk. Jalan ke truk curam dan kami disuruh cepat mendaki. Mereka yang lambat mendaki, contohnya anak-anak dan orang tua, dilemparkan begitu saja ke truk. Kami baru saja sampai menapak di truk... Truk yang kami tumpangi bersama para milisi langsung ke Betun. Di Betun kami sangat menderita... Kami tinggal di sana hanya dua bulan. Pada 26 November kami dengar berita bahwa pengungsi bisa kembali. Kami mendaftar dan langsung pulang ke rumah.⁴⁷³

468. Di wilayah Ermera tidak tersedia cukup kendaraan untuk mengangkut semua orang. Milisi dan TNI mengatur agar truk-truk melakukan beberapa perjalanan pulang-pergi ke Atambua.* Orang-orang dipaksa keluar dari rumah mereka oleh milisi Darah Integrasi serta anggota TNI, dan naik ke truk-truk. Rumah mereka langsung dibakar setelah mereka pergi. Unit Hak Asasi Manusia UNTAET memperkirakan bahwa setelah Jajak Pendapat sekitar 43.000 orang dipindahkan secara paksa dari Ermera ke Timor Barat, sementara kurang-lebih 10.000 orang lari ke gunung-gunung. Desa-desa itu benar-benar dikosongkan dan orang melaporkan bahwa hanya keluarga milisi dan TNI yang pergi secara sukarela.⁴⁷⁴

469. Gracilda mengatakan kepada Komisi bagaimana milisi Darah Integrasi, bersama anggota TNI, mencari suaminya yang telah lari ke gunung. Gracilda lari ke Koramil Letefoho untuk mencari perlindungan. Sementara dia di sana milisi mengambil truk miliknya, mengisi truk tersebut dengan barang-barang dari toko dan warung-warung di pasar, dan memerintahkan kedua anak laki-laki Gracilda membawa truk itu ke Atambua.⁴⁷⁵

470. Beberapa komunitas dapat melawan deportasi. Pada 9 September, milisi Darah Integrasi membakar 20 rumah di *aldeia* Hunda (Letefoho, Ermera) dan sebagian besar penduduk berlindung di rumah kepala *aldeia*.⁴⁷⁶ Pada 13 September, milisi Darah Integrasi dan tentara-tentara BTT berusaha memaksa Anita dos Santos beserta keluarganya pergi ke Atambua. Mereka menolak namun terus-menerus menerima ancaman mati, terutama ditujukan kepada anak perempuannya yang merupakan anggota staf lokal UNAMET. Pada 20 September milisi datang kembali dan menembaki rumah itu, menghancurkan jendela-jendela. Namun, keluarga itu sudah meninggalkan rumah tersebut untuk bersembunyi.⁴⁷⁷

471. Perampasan dan pembakaran berlangsung selama dua minggu. Teresa de Deus menceritakan kepada Komisi bahwa rumahnya disiram dengan bensin oleh para anggota milisi Darah Integrasi ketika mereka mencari dua anak laki-lakinya yang lebih tua. Mereka sudah membakar motor milik keluarga ini dan hampir membawa dia dan anak-anaknya yang masih kecil ke Atambua ketika Interfet tiba.⁴⁷⁸

472. Seorang lelaki Timor bersaksi mengenai perekrutan paksa dirinya untuk bergabung dengan milisi Darah Integrasi. Dalam sebuah pertemuan antara komandan Darah Integrasi, F27, dan semua kepala desa di Subdistrik Letefoho, tiap-tiap kepala desa diwajibkan memberikan 50 nama pemuda untuk direkrut sebagai milisi. Nama saksi berada di antara 25 nama yang diserahkan oleh kepala desanya. Dia menceritakan bagaimana Babinsa dan tentara-tentara TNI yang bertugas di desa itu mengoordinasi para anggota milisi setempat untuk membakar sebagian besar rumah di desa mereka. Dia mengatakan bahwa pada 19 September dia dan F27, bersama dengan anggota milisi lainnya, lari ke Atambua.⁴⁷⁹

* Fokupers, *Gender-based Violations of 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, Pernyataan HRVD F9430. Evalina Soares menceritakan bagaimana anak laki-lakinya berjumpa dengan konvoi 20 kendaraan yang kembali setelah mengangkut orang-orang dari Atsabe [Ermera] ke Betun [Timor Barat] pada 16 September 1999. Setelah itu dia ditembak dari belakang ketika dia mencoba lari.

Pemindahan dan kekerasan seksual

Komisi menemukan bahwa pada masa konflik memuncak dan pemindahan besar-besaran, sepanjang masa mandat, perempuan menjadi sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual dialami oleh para perempuan yang dipaksa meninggalkan rumah mereka, juga oleh para perempuan yang tidak pergi pada September 1999.

Di Kota Ainaro, seorang perempuan muda memberitahu kepada Komisi bahwa dia diperkosa setelah hampir seluruh penduduk pergi setelah Jajak Pendapat:

Setelah pemungutan suara, semua orang telah lari ke Kota Ainaro. Keluarga saya—ayah, paman, dan adik-adik saya—semua tinggal di rumah karena kami tidak tahu semua orang sudah pergi. Banyak yang diam-diam lari ke hutan. Seorang anggota Mahidi bernama Benigno Lopes datang ke rumah kami, membawa senjata SKS kira-kira pukul 9 malam. Dia memaksa saya pergi dengannya. Katanya tidak ada seorangpun lagi di Cassa. Dia melepas semua pakaian saya dan memerkosa saya. Dia berkata bahwa merekalah yang berkuasa dan hanya mereka yang dapat menjamin keselamatan keluarga saya. Selama Agustus dan September, dia memerkosa saya lima kali. Karena keluarga saya tidak dapat menanggung ini lebih lama lagi, kami lari ke Betun di Timor Barat, bersama dengan paman saya, yaitu anggota TNI berpangkat rendah. Kami di Betun selama lima bulan, hingga 10 Februari 2000.⁴⁸⁰

Beberapa perempuan diperkosa selama masa deportasi ke Timor Barat. Beberapa contoh kesaksian dari mereka yang mengalami hal ini termasuk:

Kami dibawa ke Stadion (GOR) di Maliana oleh milisi Dadurus Merah Putih, untuk diungsikan ke Timor Barat. Kira-kira jam 4 dini hari saya diseret ke belakang stadion oleh seorang milisi. Dia mengancam membunuh saya dan memotong kemaluan saudara-saudara lelaki saya di hutan jika saya tidak bolehkan dia memerkosa saya.⁴⁸¹

Kami lari ke hutan setelah rumah saya dibakar oleh milisi Dadurus Merah Putih pada tanggal 9 September 1999, kami lari ke hutan. Dua hari kemudian suami saya pulang ke rumah untuk mencari sedikit makanan tetapi dibunuh milisi. Esok harinya, anak laki-laki saya dan saya berusaha menemukannya, tetapi dalam perjalanan ke sana kami ditangkap milisi. Mereka menghunus pisau ke anak lelaki saya. Saya diperkosa. Akhirnya, kami dipaksa pergi ke Timor Barat.⁴⁸²

Ada juga yang diancam secara seksual:

*Pada tanggal 8 September 1999, komandan Dadurus Merah Putih memaksa saya dan kakek saya pergi ke Maliana. Kakek saya capek dan berhenti berjalan. Seorang milisi mengancam saya. Dia bilang kami tidak boleh berhenti, atau dia akan memasukkan pedangnya ke vagina saya. Saya sangat ketakutan. Saya menggendong kakek saya selama sisa perjalanan ke Maliana.*⁴⁸³

Terakhir, para perempuan juga rentan di kamp-kamp pengungsian:

*Pada bulan Oktober 1999, saya diancam seorang milisi Sakunar, dengan pisau, untuk pergi ke Timor Barat. Lalu dia membakar rumah saya dan enam rumah lain. Saya disuruh mencari laki-laki setempat, untuk membawa kami semua ke Timor Barat. Saya dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Timor Barat. Di sana saya diancam dan diperkosa oleh milisi Sakunar.*⁴⁸⁴

473. Komisi menerima laporan mengenai serangan terhadap Sura, Selihasan (Same, Manufahi) pada 16 September 1999. Milisi Ablai (Aku Berjuang Laksanakan Amanat Integrasi), anggota-anggota Gardapaksi, dan anggota TNI dari Batalion 311 di Betano melakukan penyerangan tersebut. Beberapa penduduk desa sudah lari ke hutan di Fatukuak. Milisi dan tentara-tentara mulai membakari rumah dan menaikkan orang-orang ke kendaraan dan dibawa ke Betano. Milisi lalu kembali ke desa itu untuk membunuh ternak. Penduduk kemudian dipindahkan secara paksa ke Atambua.⁴⁸⁵

474. Dua orang perempuan dari *aldeia* Orema, Holarua (Same, Manufahi) memberitahu Komisi bahwa mereka diperkosa pada 17 April 1999, sementara serangan oleh milisi Ablai dilaksanakan. Setelah hasil Jajak Pendapat diumumkan, mereka dideportasi paksa oleh milisi ke Atambua, dan baru bisa kembali ke rumah masing-masing pada 7 Desember 1999.⁴⁸⁶

475. Ketika milisi Ablai menyerang rumahnya di Betano pada 16 September, Reinalda Tilman lari ke hutan meninggalkan suaminya yang cacat, Guilhermeno Tilman. Milisi Ablai membakar rumahnya ketika suaminya masih berada di dalam. Dia berhasil melarikan diri tetapi namun terluka parah. Tiga hari kemudian dia meninggal.⁴⁸⁷

Distrik bagian timur

476. Walaupun jumlah relatif orang dari distrik bagian timur (Baucau, Manatuto, Viqueque, dan Lautém) yang dideportasi paksa ke Timor Barat lebih sedikit, Komisi memiliki bukti bahwa ada pemindahan meluas yang terjadi akibat konflik. Sebagian besar orang lari ke hutan dan gunung untuk mencari keselamatan dan menetap di sana untuk sementara hingga tibanya Interfet pada akhir September. Beberapa orang dideportasi paksa ke Timor Barat oleh milisi dan militer Indonesia. Yang lainnya pindah secara sukarela ke Timor Barat, terutama orang Timor anggota pasukan keamanan Indonesia dan pegawai negeri sipil. Sejumlah pernyataan pilihan yang diterima oleh Komisi telah diringkas dalam tabel-tabel di bawah ini.

477. Di Viqueque, diperkirakan ada 10.000 orang yang dideportasi. Pada 20 September, empat kapal dengan kapasitas masing-masing 4.000 orang dilaporkan meninggalkan Beço (Viqueque, Viqueque) menuju Timor Barat, penuh dengan penduduk sipil. Sekitar 2.149 rumah dan 70% gedung sekolah dihancurkan.⁴⁸⁸

Deportasi dan Pemindahan Distrik Lautém, Baucau, Manatuto, Viqueque

Tabel 16: Deportasi dan Pemindahan di Distrik Lautém (milisi Tim Alfa)

| HRVD | Nama dan Lokasi | Ringkasan |
|------------------------|----------------------------------|--|
| 02268 | Nicolau Mendes, Parlamento, Moro | Pada September 1999 penduduk Lautém dipaksa berkumpul di Desa Com oleh anggota-anggota Tim Alfa untuk naik kapal menuju Timor Barat. Saya dipaksa untuk bergabung dengan operasi Tim Alfa di Desa Serelau, Baduro dan <i>aldeia</i> Laikara di mana mereka membakari rumah-rumah penduduk. |
| 02270 | Ilda Eugenia, Parlamento, Moro | Tanggal 12 September seorang anggota Tim Alfa yang saya kenal memaksa saya dan keluarga saya untuk pergi ke Kupang. Kami dibawa ke pelabuhan di Com dan menunggu sebuah kapal untuk membawa kami. Pada tengah malam, seorang anggota TNI mengancam saya dengan senjata. |
| 02285; diperkuat 03941 | Jorge Ximenes, Parlamento, Moro | Tanggal 21 September saya pergi bersama kira-kira 20 orang teman ke Ira-ara, Parlamento, untuk mencari makanan karena kami kehabisan makanan. Tiba-tiba, milisi dari Tim Alfa mulai menembaki kami. Dua orang teman saya, Alfredo Araújo dan Calisto Rodrigues, ditembak mati. |

Tabel 17: Deportasi dan Pemindahan di Distrik Baucau (milisi Tim Saka)

| HRVD | Nama dan Lokasi | Ringkasan |
|-------|-----------------------------|---|
| 07746 | Tomas Soares, Abo, Quelicai | Pada 2 September, anggota-anggota milisi Tim Saka dan tentara-tentara Rajawali memukuli saya dan keempat teman saya dengan senjata dan sepatu bot mereka. Seorang tentara menyayat pundak salah satu teman saya dengan pedang. Kemudian kami dibawa ke Luga, di Desa Abo. Di sana kami menyaksikan seorang anggota Tim Saka mencekik seorang ibu dan anaknya, hingga mereka terkencing-kencing. Mereka dipaksa untuk pergi ke Atambua dengan ayahnya. Dalam perjalanan kami kembali dari Abo ke Quelicai, saya menyaksikan milisi Tim Saka membakar rumah saya. |

| | | |
|-------|--|---|
| 02311 | Celestina dos Reis, Mulia, Baucau | Pada 7 September saya dan keluarga saya lari dari Uailaka (Laga) ke Quelicai karena takut terhadap serangan TNI dan Tim Saka. Pada 10 September ditembak mati oleh seorang TNI yang berada di atas truk Milsas (Tim Saka). Dua orang temannya berhasil melarikan diri. |
| 07089 | Joaquim Maria Sarmento, Guruça, Quelicai | Pada 8 September milisi Tim Saka membakar rumah-rumah di Guruça membunuh beberapa ternak. Anak-anak dari polisi dan tentara-tentara TNI dipaksa untuk pergi ke Baucau. Keesokan harinya seorang pemuda dari Guruça, Celestino, dibunuh oleh seorang komandan Tim Saka. Komandan ini juga mengancam seorang lagi dengan menodongkan pistol di dadanya kemudian membakar rumah orang itu. |

Tabel 18: Deportasi dan Pemandahan di Distrik Manatuto (milisi Mahadomi)

| HRVD | Nama dan Lokasi | Ringkasan |
|-------|--|--|
| 07949 | Octavio Carceres de Carvalho, Lakumesak, Laclo | Pada 6 September penduduk Lacló menantikan sebuah serangan oleh milisi Mahadomi dan TNI. Kami lari ke hutan, akhirnya kembali lagi ke rumah kami pada hari yang sama. Tanggal 7 September, kami lari ke gunung-gunung karena polisi dan militer Indonesia mulai membakar gedung-gedung pemerintah dan Mahadomi mulai berpatroli di Lacló. Sedikitnya empat orang mati dan banyak lainnya yang terluka karena tembakan. |
| 08282 | Roserio Maia, Manatuto | Karena saya dikenal sebagai pendukung kemerdekaan yang sudah dua kali ditahan (di pangkalan polisi Manatuto dan Dili), saya didampingi ke Kupang oleh kepala polisi lokal (Kapolres) dari Manatuto pada 6 September 1999. Saya kembali dari Kupang dan mendapati rumah saya yang sudah dibakar oleh milisi Mahadomi. |
| F9314 | Ester Luruk Koli, Lakumesak, Lacló | Tanggal 7 September 20 tentara TNI membawa senjata (dari BTT dan Koramil) dan tiga Milsas mulai melepaskan tembakan di jalan-jalan dan menyerang rumah saya, karena kakak laki-laki saya adalah koordinator pemuda kemerdekaan. Beberapa pemuda Lacló melawan dengan batu. Dua orang tertembak mati, termasuk suami saya, Domingos Carceres. Penduduk lari ke Hatu'un dan tinggal di sana selama dua minggu. |

| | | |
|-------|----------------------------------|--|
| 06561 | Antonio Almeida, Aitas, Manatuto | Pada 15 September saya bersama keluarga, tetangga-tetangga saya lari ke hutan karena terjadi tembak-menembak antara golongan pro-otonomi dan prokemerdekaan. Belakangan ketika kami pergi ke sebuah tempat di mana kami sebelumnya sudah menyembunyikan makanan, kami tertangkap oleh milisi Mahadomi dan tentara-tentara Milsas lalu dibawa ke markas TNI. Dari sana kami diserahkan kepada milisi Mahadomi dan dipukuli di markas mereka. Kami dikembalikan lagi kepada TNI untuk diinterogasi. Tetangga saya, Sebastião Biti dan Cazamiro, diseret pergi oleh empat TNI dan tidak pernah kembali. Esok harinya saya dan istri saya berhasil melarikan diri. |
|-------|----------------------------------|--|

Tabel 19: Deportasi dan Pindahan di Distrik Viqueque (milisi Naga Merah)

| HRVD | Nama dan Lokasi | Ringkasan |
|-------|------------------------------------|--|
| 03730 | Victor Soares, Bairro Pite, Dili | Setelah pengumuman hasil pemilihan, istri saya lari ke Dare pada 7 September sementara saya tinggal di rumah bersama ibu saya. Hari berikutnya pada pukul 01.00 milisi Naga Merah bersama dengan polisi Brigade Mobil (Brimob) membawa kami dengan paksa ke markas di Bairro Pite untuk interogasi. Kami dipindahkan ke Balai Prajurit, yaitu sebuah tempat pertemuan publik untuk tentara. Pada 13 September, sekitar 20 milisi Naga Merah dan TNI yang saya kenal, datang mencari saya. Karena mereka tidak dapat menemukan saya, mereka memukul kakak ipar saya, Afonso Gonçalves, dan menembaknya hingga mati. |
| 04129 | Paulino Freitas, Carabaco Viqueque | Pada 4 September, saya dan keluarga saya meninggalkan rumah saya di Rai Tahu, Uma Uain Kraik. Tanggal 18 September kami dapat melihat asap dari api yang menyala-nyala, dari tempat kami berada. TNI dan milisi Naga Merah membakar rumah-rumah dan semua harta benda penduduk Uma Uain Kraik. |

Oecussi

478. Distrik Oecussi, yang umumnya lolos dari pemindahan paksa selama masa pendudukan, mengalami deportasi besar-besaran setelah pemungutan suara berlangsung. Pengerahan Interfet yang terlambat ke Oecussi juga berarti bahwa milisi dapat dengan bebas melakukan kekerasan dan penghancuran di distrik itu lebih lama daripada di daerah-daerah lain di wilayah ini.⁴⁸⁹

479. Pada 6 September UNAMET mengevakuasi kantornya di Oecussi ke Dili dan suasana kekerasan serta deportasi di sanapun menjadi semakin intens. Dengan menggunakan parang dan senjata rakitan, sekitar 200 milisi bersenjata menyerang Tumin, Quebesiolok, Nonquican, dan Nibin, membunuh 17 orang dengan parang dan senjata buatan tangan, dan mencoba membunuh lima orang lagi. Rumah dibakar dan dijarah; penduduk yang masih hidup dikumpulkan dan dibawa ke Imbate di Timor Barat. Setibanya di Timor Barat, para pengungsi itu didaftarkan dan disortir menurut kelompok umur dan pendidikan. Anggota-anggota TNI, Polri, dan anggota-anggota milisi Sakunar memisahkan 80 pemuda yang berpendidikan dan mengikat mereka sepasang-sepasang. Mereka dipukuli saat berjalan menuju pinggir sungai di Passabe, kemudian dibunuh dengan ditembak dan ditusuk dengan parang. Tujuh orang berhasil lolos dari maut dan lari ke hutan.⁴⁹⁰ (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.)

480. Unit Hak Asasi UNTAET melaporkan bahwa setelah pemungutan suara, sekitar 4.500 orang dideportasi paksa ke Timor Barat, dimuat ke dalam truk-truk yang dibawa ke Oecussi khusus untuk tujuan itu. Ada juga yang dipaksa untuk jalan ke Kefamenanu (Timor Tengah Utara, NTT). Menurut laporan, TNI membagi-bagikan senjata api dan motor kepada para anggota milisi Sakunar. Milisi menggunakan truk untuk mengangkut segala harta-benda yang dapat dipindahkan dan membawa penduduk sipil ke perbatasan Indonesia. Anggota milisi Sakunar menyisir satu rumah ke rumah lainnya, memaksa penduduk naik ke truk, dan melepaskan tembakan ke udara saat mereka berkendara. Sekitar 10.000 orang lari ke bukit-bukit.⁴⁹¹

481. Pada 18 September, rumah di Pante Makassar sudah dijarah dan dibakar tanpa pandang bulu. Satu-satunya gedung yang tidak dihancurkan adalah dua gereja Katolik. Milisi dan TNI penjarah mengambil segalanya: atap, jendela, pintu, dan perabotan, semua dibawa ke Timor Barat. Daerah yang bisa terhindar dari penghancuran hanyalah Citrana, Bebo, dan Baoknana di Subdistrik Nitibe (di mana seorang pemimpin setempat dapat membujuk milisi untuk tidak menghancurkan gedung-gedung), Mahata di Pante Makassar, dan Passabe.⁴⁹²

482. Pada 23 September milisi menyerang kamp pengungsi di Cutete di mana 5.000-an orang berlindung di bawah naungan Pastor Richard Daschbach. Rumah-rumah darurat dibakar, dua orang ditembak, dan para pengungsi lari berpecah. Seorang anak laki-laki berumur 14 tahun berjalan kaki dari Oecussi, melintasi Timor Barat ke perbatasan dengan Timor-Leste untuk memberitahu pihak berwenang di Timor-Leste mengenai situasi di Oecussi, dan memohon Interfet turuntangan di sana.⁴⁹³

483. Pembunuhan dan penghancuran oleh milisi berlanjut hingga Oktober. Pada 20 Oktober milisi Sakunar bergerak ke Maquelab untuk mencari orang-orang yang bersembunyi di hutan, yang bertahan hidup dengan dedaunan dan akar-akar liar yang dapat mereka kumpulkan. Milisi menemukan satu kelompok yang terdiri atas 300 orang dan memaksa mereka kembali ke kota, sambil memukuli para lelaki. Dua pemimpin CNRT yang berhasil diidentifikasi, dipisahkan dari kelompok tersebut dan dibunuh. Seorang wakil komandan memerintahkan para pengungsi itu untuk berkumpul dan duduk di tanah. Dia memilih empat laki-laki, seorang anggota

staf lokal UNAMET, dua pemimpin CNRT, dan seorang pemimpin pelajar. Dia menyuruh mereka berdiri dan menembak mereka di depan para penduduk sipil yang ketakutan. Kemudian pada hari itu juga Interfet tiba di Oecussi dan melisipun lari ke Timor Barat.⁴⁹⁴

484. Tabel berikut ini merangkum kesaksian lainnya mengenai kekerasan, pemindahan, dan deportasi di Distrik Oecussi.

| Tabel 20: Deportasi dan Pemindahan di Distrik Oecussi (milisi Sakunar) | | |
|--|--|--|
| HRVD | Nama dan Lokasi | Ringkasan |
| 00335 | Bento Bene, Bene Ufe, Nitibe | Pada bulan September 1999 situasinya sangat buruk maka saya mengungsi ke Oepoli, Kupang. Namun, saya dipaksa untuk bergabung dalam operasi-operasi milisi Sakunar di Citrana oleh pemimpin milisi F28 dan F29, keduanya orang Timor. Di Citrana, bersama dengan kira-kira 30 milisi, saya membongkar rumah-rumah milik pemerintah. Saya menyuruh penduduk Citrana untuk pergi ke Oepoli melarikan diri dari amukan milisi. |
| 00346 | Simon Palat, Bene Ufe, Nitibe | Kami lari ke hutan ketika Sakunar memulai operasi-operasi skala besarnya pada bulan September 1999. Rumah saya dan 65 orang lainnya dibakar. |
| 00368 | Martino Seco, Banafi, Nitibe | Karena serangan Sakunar di <i>aldeia</i> Tumin (Bobometo), saya lari ke Sai-Tau, Timor Barat. Di sana, di bawah ancaman mati, saya dipaksa untuk bergabung dengan kegiatan-kegiatan militer oleh seorang babinsa F30, seorang Timor. |
| 00382 | Fernão Sequeira, Lela Ufe, Nitibe | TNI dan milisi Sakunar membakar rumah kami pada September 1999. Kami dipaksa membayar Rp70.000 kepada milisi sebagai jaminan keselamatan sebelum kami dapat kembali ke rumah kami di Oelfab. |
| 00383 | José Poto Lela Ufe, Nitibe | Situasi di desa kami sangat tegang, setelah milisi Sakunar, dipimpin oleh F31, seorang Timor, membunuh dua pendukung CNRT. Istri saya, Celeste Busan, dihadang oleh milisi yang menyanak saya. Karena dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan dia dipaksa berdiri di bawah sinar matahari selama empat jam. Dia baru akan dideportasi, bersama dengan kedua anak kami, ketika saya menyamar sebagai milisi dan membawanya ke tempat yang aman. Rumah kami dan banyak orang-orang lainnya sudah dibakar oleh milisi, TNI, dan polisi. |
| 00399 | Fermino Taequi, Bobocase, Pante Makassar | Setelah menyaksikan pembunuhan dua pemuda oleh 12 milisi Sakunar di Sikone-Cunha, saya lari dengan kira-kira 15 orang ke gunung-gunung di Fatubena. Kami menetap di sana selama beberapa minggu. |

| | | |
|-------|---|--|
| 00891 | Angelina Cuono, Usi Taco, Nitibe | Tiga puluh milisi yang berada di bawah komando F32, seorang Timor, membakar rumah-rumah di Desa Usitaco. Saya lari ke Timor Barat tetapi di sana terus-menerus diteror sampai saya kembali. |
| 02192 | AM, Tokoluli, Railaku | Pada tanggal 15 September saya diperkosa oleh seorang milisi Aitarak. Esok paginya saya melaporkan kejadian ini kepada komandan lokal Sakunar, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian milisi Aitarak itu datang lagi dan mencoba membunuh saya di dekat sungai. Saya berteriak minta tolong dan seorang polisi lokal serta seorang saudara membantu. Setelah itu saya dan keluarga saya menjadi pengungsi di Hali Ulun, Atambua (Timor Barat). |
| 00333 | Juliana Ua, Bene Ufe, Nitibe | Pada 15 September, milisi Sakunar dan Besi Merah Putih (BMP) mengancam akan membunuh saya dan saudara saya Celestino Te'u Elo karena kami mendukung kemerdekaan. Kami lari ke gereja. Tiga hari kemudian rumah kami dibakar dan milisi mengejar kami di gereja. Mereka menarik rambut saya dan membuat seolah-olah akan memotong leher saya. Kami dipaksa untuk pergi ke Oepoli, Kupang. |
| 00321 | Anastasia Quelo, Lela Ufe, Nitibe | Pada September 1999 situasi sangat buruk, maka kami membayar Rp70.000 dan seekor sapi kepada seorang milisi Sakunar. Tetapi keadaan tidak membaik, jadi saya dan keluarga saya lari ke Neon Ben di Timor Barat. |
| 00310 | Marthinho Mene Bene Ufe, Nitibe | Kami dipaksa untuk membayar sejumlah uang kepada komandan milisi Sakunar, kemudian kami pun dipindahkan ke Timor Barat. Milisi mengambil semua seng dari atap-atap dan mencuri barang-barang dari koperasi lokal di Citrana dan Boaknana. |
| 00358 | Marcolino Tafin, Bobocasa, Pante Makassar | Pada 23 September milisi Sakunar di bawah perintah F32, F33, dan F34, semua orang Timor, membakar semua rumah-rumah di Desa Bobocasa. Ini termasuk perabotan, jagung, dan beras yang ada di lumbung. Mereka juga merampas semua ternak kami. Saya dan keluarga saya lari ke hutan, bersembunyi di Faub selama satu minggu. |
| 00371 | Ilena Mauno, Taiboco, Pante Makassar | Pada 20 Oktober, 40 milisi menyerang rumah kami, mengatakan bahwa kami telah memberi tempat berlindung untuk orang-orang yang telah lari ke hutan. Mereka membunuh suami saya, Antonio Beno, dan mencoba untuk membakar rumah saya selagi saya masih ada di dalamnya. Saya lari. Banyak rumah yang dibakar malam itu, termasuk rumah tetangga kami, Quelo Meni. Dia juga dibunuh di dekat Sungai Suni Ufe. |
| 00375 | Terezinha Kolo, Taiboco, Pante Makassar | Tanggal 20 Oktober, saya bersama suami dan anak-anak saya lari dari serangan yang dilakukan milisi Sakunar. Suami saya ditembak di bagian siku oleh komandan milisi F10, seorang Timor. Kami dibawa ke pasar di mana empat orang laki-laki baru saja dibunuh dengan senapan mesin. |

| | | |
|-------|--|---|
| 00377 | Matias Slain Colo, Taiboco, Pante Makassar | Kami dibawa ke Pasar Makelab di mana seorang milisi Sakunar memukul mulut saya dengan parang. Gigi saya hancur tapi saya diam saja. Kira-kira 30 menit kemudian seorang milisi Sakunar F10 membawa dua laki-laki, Atili da Costa dan Paulus Cussi, ke belakang toilet dan menembak mati mereka. Setelah 30 menit lagi, F32 datang dengan motor. Tanpa banyak bicara, dia memanggil João Talias, Paulus Kelu, Mateus Ton, dan Francisco Taek (sekretaris desa Taiboco), dan menembak mereka satu per satu. Kami disuruh menunduk. Kami tidak boleh teriak atau menangis. |
| 00384 | Fatima Aban, Taiboco, Pante Makassar | Pada 20 Oktober saya dan keluarga saya lari ke Sai Laut. Di sana kami melihat pembunuhan satu orang yang dilakukan oleh TNI dan milisi Sakunar. Kami dibawa ke Maun-Ana dengan paksa. Kemudian kami dipindahkan ke sebuah kamp pengungsi di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di Timor Barat. |

Pengungsi di Timor Barat

485. Pada 6 September 1999 arus pengungsi mulai berdatangan di Timor Barat. Di antara orang-orang ini ada yang pergi atas kehendak sendiri mencari keamanan dan ada yang dengan paksa dinaikkan ke truk, kapal, dan pesawat. Ada yang dapat menetap di rumah anggota keluarganya atau mampu menyewa akomodasi sendiri. Meskipun demikian, sebagian besar pengungsi tetap berada dalam kelompok-kelompok yang diatur berdasarkan tempat asal mereka, dan tetap di bawah pengawasan milisi lokal mereka. Penduduk Belacasac (Maucatar, Covalima) menceritakan saat mereka di Timor Barat:

Di kamp pengungsi di Wemasa (Belu, Timor Barat) dan daerah di sekitarnya, orang-orang menderita kekurangan makanan, tempat berteduh, pakaian, dan obat-obatan. Kami tidak bebas melakukan aktivitas kami. Kami selalu diintimidasi dan diteror oleh milisi Laksaur di bawah komando F35.⁴⁹⁵

486. Terdapat kurang-lebih 200 kamp pengungsi di seluruh penjuru Timor Barat. Menurut pekerja organisasi nonpemerintah yang menjalankan proyek dokumentasi mengenai kondisi di kamp-kamp tersebut, terutama tentang situasi para pengungsi perempuan, kehidupan di kamp-kamp itu sangat berat. Di beberapa kamp, barak disusun berbaris-baris. Di tempat lain, tempat tinggalnya hanya berupa lembaran-lembaran plastik atau bahan apapun yang bisa didapat, dibangun asal-asalan di sekitar rumah-rumah lokal, di hutan, atau sepanjang pinggir sungai. Fasilitas sanitasi tidak tersedia di kamp-kamp ini. Banyak lokasi pengungsi yang saling berdekatan dan terletak di tengah-tengah komunitas Timor Barat.⁴⁹⁶

Deportasi massal ke Timor Barat

Satu organisasi nonpemerintah yang bekerja di Timor Barat melaporkan tentang situasi di Kabupaten Belu, 15 September 1999:

[Pengungsi] yang tiba dari Timor-Leste terutama berasal dari Dili, Maliana, Bobonaro, dan Ainaro. Sekitar 80% adalah perempuan, 10% anak-anak di bawah lima tahun, dan 1% bayi. Terdapat 20% anak-anak usia sekolah. Pengungsi laki-laki jarang ditemui di kamp, kecuali yang sudah tua dan anak-anak di bawah lima tahun.

Eksodus pertama pengungsi Timor memasuki Timor Barat pada 3 September 1999 dengan menggunakan truk, mobil, dan kapal. Kelompok besar pengungsi kedua tiba pada 10 September 1999, dibebani harta-benda mereka—lemari es, televisi, dll. Sepanjang jalan dari Kupang ke Atambua, kami juga melihat banyak barang rampasan dari Dili yang dibawa ke Timor Barat oleh TNI, polisi, dan milisi.

Di Distrik Belu-Atambua (berjarak kira-kira enam jam perjalanan darat dari Kupang, atau kira-kira tiga jam ke Dili), para milisi terutama dari kelompok Aitarak dan Besi Merah Putih, berkeliling di jalan-jalan dengan truk, mobil, dan motor, dengan membawa senapan dan pedang panjang. Sampai saat ini milisi tersebut masih mencari siapapun yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan. Beberapa kendaraan itu jelas-jelas milik UNAMET. Polisi dan TNI tidak pernah diketahui memberhentikan mobil-mobil ini untuk pemeriksaan atau menghalangi mereka dengan cara apapun. Kasus-kasus serupa dilaporkan juga terjadi di Kupang.

Para pengungsi ditempatkan di sekolah umum, lapangan, terminal bus, dan gereja/biara. Sebagian besar adalah orang-orang golongan menengah. Orang-orang golongan atas sudah pergi dengan pesawat ke Darwin atau ke Jakarta. Penduduk Timor yang miskin ditinggalkan di kamp-kamp atau masih bersembunyi di gunung-gunung di Timor-Leste. Pemerintah daerah Timor Barat memberikan lembaran-lembaran plastik kepada pengungsi untuk membuat tenda dan gubuk-gubuk. Di gereja dan biara di Nenuk dan Kupang, para pengungsi tidur di aula dan di bawah atap, juga di garasi dan ruang kelas.

Jumlah normal penduduk Atambua adalah kurang lebih 30.000 orang (Kabupaten Belu: 243.169). Pagi ini (15 September) Uskup Atambua memberitahu kami bahwa sampai pada pagi ini jumlah pengungsi yang berada di diosesnya sudah mencapai 85.000 orang.⁴⁹⁷

Bantuan kemanusiaan

487. Tanggapan kemanusiaan terhadap membanjirnya pengungsi ke Timor Barat terjadi relatif cepat. UNHCR serta organisasi nonpemerintah lokal dan internasional, juga perwakilan pemerintah Indonesia serta Palang Merah Indonesia sudah mulai memberikan tempat bernaung darurat, makanan, air, dan sanitasi sejak September 1999. Sampai pada akhir Maret 2000, bantuan kemanusiaan yang sangat besar mengalir ke Timor Barat. Menurut para pengamat organisasi nonpemerintah, pembagian standar makanan terdiri atas 400 gram beras dan Rp1.500,00 per orang per hari untuk tambahan makanan.⁴⁹⁸ Situasi bertambah buruk ketika UNHCR dan lembaga-lembaga lainnya keluar dari Timor Barat pada 2000, menyusul pembunuhan terhadap tiga orang stafnya.

488. Walaupun adanya upaya kemanusiaan ini, banyak anggota komunitas menggambarkan situasi yang sangat mengengaskan di kamp-kamp di Timor Barat:

Selama dalam pengungsian penduduk hidup dalam keadaan kekurangan yang berkepanjangan, terancam, dan terasing dari lingkungan sekitar—tidak punya kesempatan kerja atau bercocok tanam, tanpa rumah untuk berlindung, tanpa apa-apa. Dalam keadaan ini, sejumlah orang mati akibat kekurangan makanan, gizi, obat-obatan, sanitasi, dan air bersih.⁴⁹⁹

Keamanan

489. Ancaman terbesar yang dialami oleh para pengungsi dan para pekerja kemanusiaan adalah tidak adanya keamanan. Pekerja bantuan kemanusiaan dalam negeri dan internasional menemukan cukup banyak bukti bahwa milisi bersenjata (atau yang mungkin bersenjata) adalah orang-orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas kamp-kamp itu. Milisi sering memegang posisi yang kuat sebagai distributor makanan, ketua kamp, atau penjaga di pos-pos keamanan. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan, para pengamat organisasi nonpemerintah melaporkan melihat senapan di kamp-kamp itu atau mendengar keterangan mengenai hal tersebut. Orang-orang yang menguasai kamp-kamp itu juga menguasai bantuan yang mengalir ke sana.

490. Para pengungsi sebagian besar tidak terlindung dari kekerasan milisi. Akses ke kamp-kamp sangat terbatas akibat intimidasi dan kekerasan dari milisi. Misalnya, Komisi mendengar pernyataan dari Deolindo Ximenes yang menceritakan tentang penculikan dan penghilangan Venancio do Rêgo, kepala Desa Fatumean (Fatumean, Covalima). Pada 8 September 1999, delapan milisi Laksaur yang dikenali identitasnya membawa Venancio dari tempat tinggal daruratnya di kamp di Nenuk (Atambua), tempat dia tinggal bersama keluarganya. Mereka memukuli dan menaikkannya ke belakang motor. Venancio tidak pernah kembali ke keluarganya.⁵⁰⁰

491. Milisi juga terus merampas dan menyerang para pengungsi Timor Barat. Ciprianus José (Covalima) mengatakan kepada Komisi bahwa 15 milisi memukuli

dirinya dan pamannya pada 9 September 1999 di sebuah kamp di Timor Barat, sambil membawa senapan dan parang. Mereka berdua dipukuli selama satu hari dan tidak diberi makanan. Di akhir penyiksaan ini, milisi mencuri kerbau yang dibawanya dari Timor-Leste.⁵⁰¹

492. Staf UNHCR mengalami beberapa macam gangguan dari milisi di Timor Barat. Gangguan tersebut termasuk kelompok-kelompok milisi memblokir jalan masuk ke kamp-kamp, melempar batu, dan tembak-menembak ke udara.⁵⁰² Tindakan milisi ini menghalangi akses para pengungsi ke UNHCR, dan sebagai akibatnya, UNHCR terpaksa memulai operasi “ambil-dan-lari”. UNHCR memarkir truk-truknya di depan kamp dan bergerak secepat mungkin untuk “mengeluarkan” para pengungsi sebelum anggota-anggota milisi dapat merespons.⁵⁰³ UNHCR melaporkan total 120 insiden penyerangan, gangguan, serta intimidasi terhadap para pekerja kemanusiaan dan pengungsi selama 12 bulan kehadirannya di Timor Barat. Pada Agustus 2000 UNHCR terpaksa menutup operasi di kamp-kamp itu ketika anggota-anggota stafnya diserang dan terluka parah saat mengirimkan bantuan ke Kamp Naen, di luar Kota Kefamenaunu. Seminggu setelah melanjutkan kembali operasi-operasinya, UNHCR menarik diri sepenuhnya setelah terjadi pembunuhan tiga anggota staf UNHCR lainnya di Atambua pada 6 September 2000.⁵⁰⁴ Lembaga-lembaga internasional lainnya pun ikut mundur. Beberapa organisasi nonpemerintah lokal untuk sementara juga menghentikan semua kegiatan kemanusiaan karena situasi yang berbahaya di kamp-kamp itu.

493. Para pengungsi rentan terhadap pemerasan yang dilakukan setiap hari oleh “jasa pengamanan” milisi di kamp-kamp itu. Komisi diberi laporan mengenai suatu kejadian pemerasan sebagai berikut: Seorang Timor diancam mati oleh para anggota milisi Sakunar. Dia dan keluarganya melarikan diri ke hutan, tapi mereka ditangkap oleh seorang milisi Aitarak, dan dibawa ke Timor Barat. Di sana, tiap keluarga dipaksa membayar Rp40.000 kepada kepala desa sebagai jaminan atas hidup mereka.⁵⁰⁵

494. Dalam diskusi mereka dengan Komisi, penduduk Memo menceritakan bagaimana Babinsa mengintimidasi dan memaksa orang menyeberang perbatasan ke Turiscai, Hakesak, dan Atambua (Timor Barat). Beberapa orang lari ke rumah bupati F36, seorang Timor, hanya untuk ditertawakan dan dipukuli. “Ketika kami tiba di kamp pengungsi di Turiscai, kami dipaksa membayar kepala desa untuk menjamin keselamatan kami. Mereka menyuruh kami membayar tiga kali. Kami membayar Rp5.000-10.000 untuk orang-orang biasa dan Rp10.000-20.000 untuk pegawai negeri sipil.”⁵⁰⁶

Pengungsi perempuan

495. Di kamp-kamp pengungsi, perempuan adalah golongan yang paling rentan—baik secara ekonomi maupun secara fisik. Pengungsi-pengungsi perempuan mendapat sedikit kesempatan ekonomi sehingga mereka bergantung pada laki-laki, yang juga tertekan oleh situasi pascakonflik yang berdesak-desakan dan kacau. Sering pula ada laporan mengenai kekerasan rumah tangga terhadap

pengungsi perempuan. Dalam kondisi yang berdesak-desakan di barak, kebebasan pribadi samasekali tidak ada. Kehadiran mereka yang begitu tak terlindungi, tidak adanya perlindungan hukum, dan diperburuk dengan kehadiran milisi di kamp-kamp, membuat pengungsi perempuan menjadi sangat rentan, terutama terhadap serangan seksual.

496. Komisi menerima banyak pernyataan dari perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan seksual di kamp-kamp pengungsi di Timor Barat. Beberapa dari mereka pernah menjadi korban di rumah mereka sebelum dideportasi atau di tempat mereka mengungsi sebelumnya di Timor-Leste. Kekerasan seksual yang mereka alami di kamp-kamp sering merupakan kelanjutan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut; sebagian perempuan lainnya menjadi korban setelah tiba di kamp-kamp (lihat Bab 7.7: Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual).

497. BM menceritakan bagaimana dia benar-benar menjadi tawanan seorang milisi yang telah memerkosanya di sekolah di Suai, tempat dia ditahan bersama perempuan-perempuan lain setelah pembantaian di gereja pada hari-hari sesudah hasil pemungutan suara diumumkan:

1. *Pada tanggal 13 September, kami dipaksa naik truk Hino bertuliskan SOE-DH. Kami dibawa ke kamp pengungsi, dekat lapangan olah raga. Lalu milisi [yang memerkosa saya di gedung sekolah] menemukan saya, dia berkata bahwa dia telah mencari saya selama dua hari. Dia marah dan memukul mulut saya dengan senjata buatan tangan, dan menendang dada dan punggung saya. Malam itu dia membawa saya ke rumahnya dan memerkosa saya lagi. Saya berada di sana tiga bulan dan enam belas hari. Pagi hari saat dia keluar, dia akan mengunci pintu. Saat dia kembali, dia akan memerkosa saya lagi. Jika dia harus pergi jauh, dia akan bawa saya. Setiap malam saya tidak bisa melawan, karena dia akan marah dan memukul saya. Tiap malam dia akan memerkosa saya. Dia tidak peduli, bahkan bilamana saya datang bulan. Pada bulan Oktober saya tidak datang bulan, tetapi dia tidak peduli. Ketika saya hamil dua bulan saya mual-mual dan tidak bisa makan, tetapi dia tidak peduli kesehatan saya dan terus memerkosa saya... Pada bulan Desember ketika dia pergi ke Atambua, dia tidak mengunci pintu. Saya berbohong kepada saudara perempuannya dan berkata bahwa saya akan menjenguk ibu saya yang sakit. Padahal saya menemui seorang lelaki muda yang dikirim ibu saya, yang sudah tahu di mana saya disekap. Dia bilang keluarga saya di Namfalus Wemasa. Kami berjalan ke Namfalus dan bersembunyi di bawah pohon. Keesokan harinya, kami kembali ke Suai.⁵⁰⁷*

498. Seorang perempuan lain diperkosa di depan keluarganya:

Pada tanggal 4 September 1999, kami lari dari Salele ke gereja Suai. Setelah serangan terhadap gereja, kami dibawa ke Manumutin, Betun. Kami tidur di teras kantor KUD, karena tidak ada tempat lagi. Pada tanggal 11 September 1999 saya bersama keluarga mengungsi ke Betun.

Sekitar jam 2.00 siang kami didatangi oleh enam orang milisi Laksaur dengan memakai sebuah kendaraan. Lima di antaranya, yang bersenjata, berjaga-jaga di kendaraan tersebut. Satu orang mendatangi tempat kami tidur. Orang itu adalah F37, seorang milisi Laksaur. Dia mengeluarkan sebuah pedang berlumuran darah dan berkata, “Kamu lihat ini. Ini pedang penuh darah empat orang yang kubunuh.” Saya tetap diam. Mereka menyuruhku masuk ke mobil... Saya tidak punya pilihan karena mereka bersenjata. Tepat setelah saya berkata ‘ya’, F37 mendorongku keras. Saya diperkosa di depan menantu laki-laki saya. Saya menangis dan menangis dan merasa sangat tidak berdaya—sepertinya saya sudah mati.⁵⁰⁸

Kembali ke rumah

499. Dalam wawancara-wawancara di Dili pada Desember 1999, para pengungsi yang kembali banyak melaporkan bahwa mereka dicegah secara fisik untuk meninggalkan kamp Timor Barat.⁵⁰⁹ Seperti yang diungkapkan oleh juru bicara UNHCR: “Pada saat seorang penduduk Timor-Leste mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan kamp dan pulang, hidup mereka berada dalam bahaya.”⁵¹⁰ Seorang pengungsi menceritakan tentang pengabsenan yang dilakukan setiap hari untuk memastikan semua orang ada di kamp. Mereka ditakut-takuti pada malam hari oleh milisi yang memperingatkan mereka mengenai bahaya jika kembali ke Timor-Leste. Seorang laki-laki yang baru kembali dari Betun, Timor Barat, mengatakan bahwa milisi memberitahu para pengungsi bahwa mereka akan dibunuh jika mereka kembali ke Timor-Leste. Seorang laki-laki lain bercerita bahwa keluarganya, yang tinggal di sebuah rumah di Silawan, Atambua, ingin pergi tetapi takut kepada milisi. Ketika diminta untuk mengisi formulir-formulir pemerintah yang menyatakan tempat tujuan yang mereka pilih, mereka mengatakan ingin tinggal, walaupun hal itu tidak benar.⁵¹¹ Efek ancaman fisik ini diperkuat oleh sebuah kampanye penyesian kepada para pengungsi bahwa kecamuk perang dan kekacauan masih terus terjadi di Timor-Leste. Para pengungsi diberitahu bahwa akan ada serangan balasan terhadap mereka jika mereka kembali, dan bahwa penjaga perdamaian Australia melakukan kekerasan, termasuk memerkosa perempuan-perempuan Timor-Leste.⁵¹²

500. Amelia Madeira mengatakan kepada Komisi bahwa para pengungsi harus meninggalkan semua harta benda mereka dan membayar ongkos agar bisa pulang:

Setelah milisi Laksaur membakar semua rumah di Suai pada tanggal 7 September, saya mengungsi bersama masyarakat lainnya ke Alas (Betun, Timor Barat). Setelah tiga minggu, kami hendak pulang. TNI dan sekretaris desa dari [desa saya] Foholulik [Tilomar, Covalima] merampas barang-barang kami. Mereka berkata, “Jika kamu ingin pulang, semua barang kalian harus ditinggalkan.” Masing-masing keluarga harus membayar kepadanya Rp75.000. Lebih-kurang ada 100 keluarga ingin pulang.⁵¹³

501. Dalam sebuah diskusi dengan Komisi, penduduk Desa Beco II (Covalima) menceritakan bahayanya jika mengatakan bahwa mereka ingin pulang, dan apa yang mereka dapat ketika kembali:

Setelah keadaan menjadi lebih tenang di Timor-Leste, keinginan kami untuk kembali harus tetap dirahasiakan, karena berbahaya jika orang-orang tahu. Kecurigaan sesama pengungsi sangat tinggi...

[Di Timor-Leste] orang-orang keluar dari hutan dan turun dari gunung, tetapi mereka tidak punya makanan atau rumah atau obat-obatan. Mereka kembali ke desa mereka dan melihat rumah-rumah serta sekolah-sekolah mereka terbakar habis. Mereka kehilangan harta milik mereka dan mereka miskin. Mereka sangat tidak berdaya.⁵¹⁴

Temuan

502. Komisi menemukan bahwa:

1. Masyarakat Timor-Leste mengalami masa pemindahan paksa berulang-ulang, sering dalam jumlah besar, antara 1975 dan 1999. Kebanyakan orang Timor-Leste yang masih hidup sekarang, mengalami paling tidak satu kali pemindahan paksa. Banyak yang mengalami beberapa kali. Semua pemindahan paksa mengakibatkan gangguan hebat pada kehidupan orang yang mengalaminya. Sebagian pemindahan secara langsung menyebabkan kematian.
2. Selama masa 1975 sampai 1999, paling sedikit 84.200 orang mati karena kelaparan dan penyakit, melebihi angka kematian yang wajar pada masa damai dan angka tersebut bisa mencapai 183.000. Kebanyakan kematian ini terjadi antara 1977 dan 1978 dan selama serangan-serangan besar tentara Indonesia terhadap basis-basis Fretilin di pedalaman, tempat penduduk sipil dalam jumlah besar bermukim, dan pada 1979 selama berlangsungnya kamp-kamp penahanan dan di daerah-daerah permukiman yang dikuasai oleh ABRI/TNI.
3. Pemindahan berlangsung dalam banyak bentuk, terjadi dalam beragam keadaan, dan berlangsung untuk periode waktu dari beberapa hari sampai bertahun-tahun. Misalnya:
 - Pada masa sebelum dan selama perang saudara Agustus-September 1975 pemindahan pada umumnya berupa pelarian untuk menghindari dikontrol atau dijadikan sasaran kekerasan oleh salah satu pihak yang berkonflik.
 - Sesudah invasi Indonesia pada Desember 1975, sebagian orang melarikan diri secara spontan karena ancaman yang dirasakan atau untuk menghindari ancaman yang sangat nyata dan kelihatan. Pada waktu yang

sama, Fretilin mengorganisasi pemindahan komunitas, terkadang dengan menggunakan pemaksaan.

- Ketika militer Indonesia meningkatkan serangannya terhadap Fretilin dan penduduk di bawah kekuasaannya pada 1977 dan sesudahnya, sebagian kelompok terpisah dan terpecah, sebagian lainnya terpaksa terus bergerak dan berpindah untuk menghindari penangkapan, dan sebagian lainnya bergerak dengan teratur ke lokasi-lokasi baru.
- Penyerangan Indonesia secara besar-besaran atas konsentrasi penduduk yang masih berada di bawah kekuasaan Fretilin yang berlangsung dari akhir 1977 sampai akhir 1978, berakhir dengan puluhan ribu orang dipaksa tinggal di dalam sejumlah kamp penampungan yang dikontrol ketat militer Indonesia. Pada kasus ini, dan serangkaian pemindahan berikutnya oleh militer Indonesia—seperti pemindahan ke Pulau Ataúro pada awal dasawarsa 1980-an—orang-orang yang dipindahkan menjadi sasaran bentuk penahanan yang ketat dan menyeluruh yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan militer Indonesia.
- Pergerakan skala besar yang terjadi pada masa sekitar Jajak Pendapat 30 Agustus 1999 mengakibatkan pelarian, baik dari TNI maupun dari kekerasan milisi, dan deportasi paksa ke Timor Barat.

503. Walaupun demikian, dalam bentuk apapun, pemindahan paksa tanpa kecuali memiliki pengaruh yang serius terhadap orang yang mengalaminya, termasuk dengan berakhir pada kematian puluhan ribu manusia pada dasawarsa 1970-an.

4. Kematian disebabkan kelaparan, berbagai penyakit yang berhubungan dengan kelaparan, kerentanan terhadap penyakit karena kelaparan, rasa takut, atau kelelahan, dan kurangnya akses terhadap perawatan medis. Ada kemungkinan bahwa lebih banyak orang meninggal karena berbagai efek pemindahan paksa daripada akibat pelanggaran lainnya. Walaupun jumlah aktual kematiannya tidak dapat dihitung secara pasti.
5. Untuk mereka yang selamat (*survivor*), pemindahan paksa merupakan penyebab langsung kemarahan dan kesedihan mendalam karena kehilangan anggota keluarga di dalam situasi keji yang berada di luar kekuasaan mereka. Pemindahan juga membuka jalan bagi berbagai pelanggaran lainnya, termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan yang tidak pantas, pembunuhan di luar hukum, kekerasan seksual, kerja paksa, dan perekrutan paksa. Pemindahan juga sering diikuti dengan kelaparan dan perampasan kemampuan untuk menghidupi diri yang disebabkan oleh penghancuran atau penghilangan akses kepada hasil panen, binatang ternak, perumahan, alat pertanian, dan tanah.
6. Pemindahan juga mengganggu pola hidup kebanyakan penduduk yang bergantung pada ekonomi subsisten yang rapuh. Satu indikasi gangguan ini adalah jatuhnya secara dramatis antara 1973 dan 1980 jumlah ternak yang berperan penting sebagai faktor produksi, alat transportasi, dan sumber kekayaan bagi masyarakat agraria Timor-Leste. Jatuhnya jumlah ternak di

Timor-Leste berkaitan erat dengan penghancuran lebih luas yang disebabkan pemindahan, yang mengakibatkan tidak diurusnya ternak ini karena penduduk melarikan diri, penghancuran terarah oleh militer Indonesia, pengonsumsi ternak ini oleh penduduk yang kelaparan dan berusaha hidup, maupun kematian ternak karena kelaparan dan pengeboman.

7. Di Timor-Leste, pemindahan merupakan pelanggaran yang terutama berpengaruh terhadap masyarakat. Pengaruh ini sering berjangka panjang dan menghancurkan integritas mereka. Pemindahan kerap dilakukan dengan sembarangan oleh militer Indonesia terhadap berbagai masyarakat atau kelompok di dalam sebuah masyarakat sebagai bentuk hukuman kolektif dan kadang sebagai suatu bentuk penyanderaan.
8. Pemindahan merupakan tema yang berlangsung terus selama mandat Komisi. Hal ini disebabkan bukan hanya karena 1974-1999 merupakan periode penuh konflik di Timor-Leste. Komisi percaya bahwa beberapa pengaruh yang paling berbahaya dari pemindahan merupakan akibat langsung pengambilan keputusan yang salah. Komisi percaya, misalnya, bahwa Indonesia berulang kali memindahkan orang-orang dari kediamannya untuk memiliki kontrol atas orang-orang ini; untuk menggunakan makanan sebagai senjata perang; dengan alasan strategi militer, menolak mengizinkan akses perwakilan kemanusiaan internasional ke Timor-Leste sampai kelaparan menjadi bencana besar, dan memindahkan dengan paksa penduduk sipil Timor-Leste ke Timor Barat semata-mata untuk tujuan politik.

Konflik internal Agustus-September 1975

504. Komisi menemukan bahwa:

9. Selama masa pembentukan berbagai partai politik, tetapi sebelum pecahnya konflik bersenjata internal, ada beberapa kejadian di mana sejumlah masyarakat melarikan diri untuk menghindari kekerasan yang dilakukan oleh para musuh politik mereka. Skala pemindahan ini relatif kecil dan jangka waktu pemindahannya relatif pendek.
10. Konflik antarpartai pada Agustus dan September 1975 menyebabkan pemindahan penduduk. Karena takut akan hukuman partai lawan, banyak orang meninggalkan rumah untuk mencari keselamatan. Pendukung Fretilin terpaksa meninggalkan rumah, yang dibakar oleh pendukung UDT. Sesudah 20 Agustus 1975, para pendukung UDT yang merasa terancam oleh Fretilin, secara spontan menyeberangi perbatasan menuju Timor Barat, Indonesia. Yang lainnya ada yang dipaksa untuk menyeberangi perbatasan oleh para anggota UDT. Sebagian kecil pergi ke Australia, Portugal, dan negeri lainnya, pada masa ini maupun nanti sesudah menetap sementara di kamp pengungsian di Timor Barat.
11. Komisi tidak mampu menentukan dengan pasti jumlah pengungsi di Timor Barat. Perwakilan bantuan internasional yang beroperasi di Timor Barat pada

waktu itu kelihatannya memperoleh jumlahnya secara langsung dari pihak berwenang Indonesia, yang mengklaim bahwa 40.000 orang Timor-Leste telah mengungsi di Timor Barat. Jumlah ini sudah diragukan banyak pihak dari orang Timor-Leste yang pada waktu itu ada di Timor Barat. Mereka mengatakan bahwa jumlah aktual pengungsi di Timor Barat jauh lebih rendah daripada jumlah yang diberikan pihak berwenang Indonesia. Para narasumber ini mengatakan bahwa pihak berwenang Indonesia membesar-besarkan jumlah yang sebenarnya agar mereka dapat memperoleh bantuan kemanusiaan yang lebih besar daripada yang seharusnya. Juga, untuk menciptakan kesan bahwa skala pertempuran yang terjadi jauh lebih besar daripada kenyataannya, bahwa sejumlah besar orang Timor-Leste tidak menghendaki pemerintahan Fretilin, dan bahwa kemenangan Fretilin di dalam perang saudara akan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas regional.

12. Komisi tidak bisa memastikan jumlah orang yang menjadi pengungsi di dalam negeri pada waktu itu. Komisi tidak memiliki cara, misalnya, untuk melakukan verifikasi terhadap perkiraan ICRC bahwa lebih daripada 50 persen dari seluruh populasi menjadi korban pemindahan paksa di dalam periode ini. Berapapun jumlahnya, kebanyakan orang kembali ke rumah masing-masing dalam hitungan mingguan sesudah melarikan diri.
13. Sebagian kecil orang yang menjadi korban pemindahan di dalam wilayah Timor-Leste maupun orang-orang yang menyeberangi perbatasan menuju Timor Barat tewas karena perampasan selama pemindahan. Di tenda pengungsi di Timor Barat ada juga berbagai pembunuhan. Umumnya yang dibunuh adalah para pendukung Fretilin yang dipaksa menyeberangi perbatasan.
14. Perwakilan kemanusiaan internasional sudah menyediakan makanan darurat dan bantuan medis ke Timor-Leste dan ke tenda pengungsi di Timor Barat.
15. Pemerintahan *de facto* Fretilin pada prinsipnya memberikan akses kepada lembaga-lembaga bantuan untuk pergi ke seluruh wilayah Timor-Leste. Dalam praktiknya, lembaga utama yang menyediakan bantuan pangan kepada masyarakat, ICRC, membatasi kegiatan bantuannya ke wilayah di sekitar Dili, sementara pasokan disediakan oleh ACFOA (Australian Council for Overseas Aid) dan didistribusikan oleh Fretilin di daerah wilayah kekuasaan mereka. Semua program bantuan itu baru mulai berjalan ketika mereka harus menghentikannya pada awal Desember 1975 karena invasi Indonesia.
16. Aliran bantuan kepada para pengungsi di Timor Barat sesudah invasi juga berkurang. Kesaksian orang di dalam tenda pengungsi, termasuk orang dari gereja, mengindikasikan bahwa makanan yang tersedia digunakan sebagai alat politik dan senjata untuk merekrut orang-orang Timor-Leste agar bertempur sebagai pasukan pembantu tentara Indonesia. Ada juga berbagai bukti bahwa makanan dan bantuan yang lainnya ditarik kembali pada April 1976 ketika orang-orang Timor-Leste di Timor Barat menolak mendukung tujuan politik Indonesia di Timor-Leste. Setelah itu, para pengungsi menghadapi kesulitan besar, dan beberapa orang meninggal.

Invasi

505. Komisi menemukan bahwa:

17. Sejumlah besar orang meninggalkan kediaman mereka untuk mengantisipasi invasi Indonesia dan sesudahnya. Sebagian besar orang meninggalkan pusat kepadatan penduduk ketika pasukan bersenjata Indonesia bergerak untuk mengambil kontrol terhadap pusat-pusat ini dari 1975 dan seterusnya. Kebanyakan yang pergi melakukan itu karena takut kehilangan nyawa mereka.
18. Banyak orang yang tinggal di luar wilayah Indonesia dan di beberapa wilayah tempat pertempuran tidak terjadi juga meninggalkan kediaman mereka secepat mungkin sesudah mendengar bahwa pasukan bersenjata Indonesia telah melakukan invasi. Mereka melarikan diri karena berbagai macam alasan: takut tewas, tanggapan atas klaim Indonesia yang akan memperoleh kemenangan dengan cepat, pelajaran dari kekejaman Indonesia pada hari-hari awal invasi, dan perintah Fretilin supaya mereka pergi.
19. Pengungsian penduduk berlangsung dalam bermacam situasi. Beberapa pengungsian dari kota dan desa tidaklah terorganisasikan; yang lainnya dikoordinasikan Resistansi yang dipimpin Fretilin.
20. Tingkat pengorganisasian evakuasi berbeda-beda, bergantung pada sejauh mana Fretilin sudah mengembangkan pengorganisasian mereka pada waktu pemerintahan *de facto*, dan langkah apa saja yang sudah diambil Fretilin untuk mempersiapkan pengungsian.
21. Fretilin sudah mengumumkan kebijakan mengenai pengungsian masyarakat sipil menuju tempat yang aman dan mengorganisasikan gerakan pembebasan nasional di pergunungan dan pedalaman. Komisi mengetahui berbagai kejadian ketika, untuk meraih tujuan tersebut, Fretilin memaksa komunitas mengungsi, termasuk orang-orang yang berkeberatan pergi.
22. Komisi belum berhasil memperkirakan jumlah orang yang menjadi korban pemindahan dalam dua tahun pertama pendudukan. Perpindahan sekitar 300.000 orang ke berbagai wilayah pendudukan Indonesia sampai 1978-79 merupakan petunjuk terbaik mengenai perpindahan skala raksasa yang dimulai pada akhir 1975. Berdasarkan fakta bahwa banyak orang meninggal di pergunungan, dan karena itu tidak pernah menjadi bagian penduduk yang dikuasai Indonesia, jumlah sesungguhnya orang-orang yang menjadi korban pemindahan sesudah invasi kemungkinan lebih besar daripada 300.000.
23. Keputusan untuk mengungsi ke berbagai gunung, termasuk keputusan Fretilin membawa sejumlah besar penduduk bersama mereka, dibuat tanpa pemikiran mendalam mengenai masalah perumahan, makanan, dan perlindungan untuk populasi yang demikian besar. Pada berbagai wilayah kekuasaan Fretilin, kondisi kehidupan pada beberapa bulan sesudah invasi sangat sulit. Kesulitan yang mereka hadapi sedikit teringankan sesudah

ada struktur untuk memobilisasi populasi untuk melakukan berbagai tugas seperti pertanian komunal dan menyediakan kebutuhan pihak-pihak yang paling rentan. Meskipun demikian, ketika struktur terorganisasi ini sudah dibentuk, Komisi menemukan bahwa tingkat kematian masih melebihi tingkat yang normal.

24. Komisi memperoleh bukti yang menunjukkan bahwa pada 1976-78 keinginan menyerah sangatlah tinggi dan meluas di berbagai wilayah kekuasaan Fretilin. Sangat mustahil untuk memperkirakan berapa banyak orang yang ingin menyerah, terutama karena mereka yang menyatakan keinginannya untuk menyerah dapat dijatuhi hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati. Tetapi Komisi menerima kesaksian yang mendukung kesimpulan bahwa beberapa komunitas yang ingin menyerah, menyembunyikan perasaan yang sebenarnya karena berbagai alasan yang tentunya dapat dimengerti. Pada waktu yang sama, Komisi juga mendengarkan berbagai kejadian di mana masyarakat sipil yang diberi kesempatan untuk menyerah, menolak melakukan hal itu, dan orang yang akhirnya diperintahkan menyerah melakukan hal itu dengan berat hati.
25. Bagi kebanyakan orang yang tinggal di pergunungan sampai berakhirnya Operasi Seroja pada akhir 1978 dan 1979, sesudah periode yang agak tenang dan dengan kondisi kehidupan kecukupan, pola kehidupan mereka adalah terus bergerak sampai tahap terakhir kampanye militer, ketika mereka terkurung bersama ribuan orang lainnya di dalam lokasi yang terisolasi. Pada tahap ini mereka berhadapan dengan serangan pasukan Indonesia yang mengerikan, yang dengan menggunakan semua cara yang tersedia, termasuk menimbulkan kelaparan, memaksa orang-orang di pergunungan supaya menyerah. Pengeboman terus-menerus mengakibatkan pencarian makanan, apalagi penanaman dan pemanenan, sangat mustahil. Pada tahap terakhir resistansi, jumlah orang yang tewas meningkat tajam.
26. Beberapa komunitas tidak melarikan diri dari pasukan invasi, ataupun memilih menyerah lebih dahulu kepada mereka. Walaupun demikian, pasukan Indonesia juga menahan masyarakat ini di berbagai wilayah yang ditentukan di mana mereka mengalami kelaparan, pembatasan pergerakan, dan tindakan represi yang keras. Komisi diberitahukan bahwa kondisi di sejumlah kamp tempat orang-orang yang sudah menyerah atau ditangkap pasukan Indonesia pada dua tahun pertama sesudah invasi sangat tak sesuai dengan kelangsungan hidup mereka sehingga terjadi banyak kematian karena perampasan atas sumber kehidupan. Semua elemen yang mengakibatkan kematian oleh perampasan besar-besaran tersebut sudah ada pada tahap awal: penolakan untuk memberikan akses langsung kepada lembaga bantuan internasional, minimnya persediaan makanan dan obat-obatan, konsentrasi populasi di berbagai kamp, ketatnya pembatasan terhadap kebebasan bergerak yang menyulitkan untuk bertani dan berkebun, penggunaan intimidasi dan teror untuk menghukum dan memastikan kepatuhan para penghuni kamp.

Penghancuran bahan makanan dan binatang ternak

506. Komisi menemukan bahwa:

27. Dari 1976 sampai 1978 pasukan bersenjata Indonesia secara sistematis menghancurkan atau merampas bahan pangan, toko-toko makanan, alat-alat pertanian, kebun dan lahan, dan binatang ternak yang dimiliki oleh masyarakat Timor-Leste yang telah melarikan diri dari kediaman dan desa mereka.
28. Komisi masih belum bisa mendapatkan berbagai bahan terekam yang mampu menjelaskan pemikiran di bawah strategi tersebut. Walaupun demikian, Komisi hanya bisa mengambil kesimpulan bahwa tujuan operasi militer Indonesia ini ialah menyebabkan kelaparan pada populasi sipil yang berada di bawah kontrol Fretilin, membuat mereka menyerah, dan menghancurkan akses Fretilin/Falintil terhadap sumber pangan.
29. Pengaruh penghancuran atas harta milik para petani yang berupa kebun, peralatan pertanian, dan binatang ternak baru terasa ketika mereka kembali ke desa asal mereka, saat mereka menghadapi kesulitan meneruskan kegiatan pertanian mereka.
30. Seiring dengan besarnya jumlah masyarakat sipil Timor-Leste yang berada di bawah kontrol Indonesia, militer Indonesia melakukan operasi khusus untuk menghancurkan berbagai sumber pangan olahan maupun liar guna menghilangkan sumber makanan pasukan resistansi. Tindakan ini juga berakibat pada kerusakan jangka panjang terhadap sumber pangan bagi semua masyarakat Timor-Leste.
31. Militer Indonesia juga secara berkala membakar dan menghancurkan hasil panen dan binatang ternak orang-orang yang sudah berada di bawah kekuasaan mereka, sebagai tindakan hukuman, cara untuk memastikan tidak ada orang yang pergi ke luar batas kamp untuk bertani di tanah mereka, atau untuk memaksa mereka berpindah ke tempat baru dan mencegah mereka kembali ke kediaman asli setelah dipindahkan.
32. Komisi juga menerima laporan mengenai pasukan Falintil yang merusak lahan agraria milik masyarakat setempat. Jumlah laporan kejadian demikian sangat sedikit, dan tidak menunjukkan akan suatu sistem atau pola yang meluas.

Kehidupan dan kematian di pergunungan

507. Komisi menemukan bahwa:

33. Bagi kebanyakan penduduk sipil Timor-Leste kehidupan di daerah perdesaan dan pergunungan relatif damai dan stabil untuk tahun pertama atau kedua sesudah invasi. Hal ini berubah ketika militer Indonesia memulai operasi di wilayah mereka.
34. Pada waktu “normal” ini, di banyak area Timor-Leste yang di bawah kekuasaan langsung mereka, kepemimpinan Fretilin mengambil serangkaian langkah untuk mengorganisasikan produksi dan distribusi pangan, dan

untuk menyediakan fasilitas dasar kesehatan. Di dalam *zonas libertadas* mereka menjalankan kebijakan yang bergantung pada dukungan masyarakat sipil. Pada berbagai kasus yang dipelajari Komisi, untuk mencapai tingkatan organisasi yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di bawah kekuasaan mereka, membutuhkan waktu. Sebelum bisa mencukupi kebutuhan sendiri, para pengungsi menderita deprivasi parah yang menyebabkan kematian beberapa orang.

35. Kepemimpinan Fretilin/Falintil memenjarakan orang-orang di bawah kekuasaan mereka atas tuduhan ingin menyerah. Mencegah penyerahan diri mungkin bisa dipertanggungjawabkan dengan keinginan untuk melindungi keamanan berbagai markas resistansi dan masyarakat sipil yang ada di dalamnya. Namun, penghukuman orang-orang yang dicurigai ingin menyerah menjadi tidak bisa dibedakan dari konflik politik di dalam resistansi.
36. Penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan lainnya oleh Fretilin/Falintil dan pemenjaraan berkepanjangan di sejumlah penjara primitif untuk masyarakat sipil yang mencoba menyerah atau dicurigai ingin menyerah, dilaporkan keji dan berlebihan, dan membawa kematian banyak tahanan. Fretilin/Falintil juga menghukum orang-orang yang dicurigai ingin menyerah, sering didasarkan atas berbagai bukti yang sangat tidak mencukupi dan tanpa mengikuti proses hukum.
37. Kebijakan Fretilin untuk mencegah penyerahan diri baru berubah di akhir 1978, ketika di tingkat kepemimpinan mereka dipaksa oleh keadaan kritis di dalam masyarakat sipil. Komisi tidak bisa memperkirakan berapa orang telah ingin menyerah pada waktu itu. Namun, Komisi telah menerima kesaksian yang menyatakan bahwa masyarakat sipil yang ditawarkan pilihan untuk menyerah sebelum akhir 1978 menolak mengambil pilihan tersebut dan ketika akhirnya diperintahkan untuk menyerah, beberapa menolak melakukannya. Pada beberapa kasus, penolakan ini tampak sebagai keteguhan hati untuk meneruskan perjuangan melawan pasukan invasi apapun biayanya. Namun, Komisi juga menerima kesaksian yang menunjukkan bahwa ketakutan yang didasari fakta mengenai perlakuan buruk pasukan Indonesia juga merupakan alasan keengganan untuk menyerah. Pada tahap akhir pemindahan mereka di bawah kekuasaan Fretilin, masyarakat sipil menghadapi pilihan sulit antara kematian di pergunungan atau kemungkinan menuju nasib yang sama apabila menyerah kepada pasukan Indonesia. Karena di dalam kenyataannya situasi sesudah menyerah tidaklah mencukupi untuk hidup.
38. Banyak orang yang meninggal karena kelaparan ataupun karena berbagai penyakit yang berhubungan dengan kelaparan ketika di bawah kekuasaan Fretilin. Walaupun banyak yang meninggal ketika melarikan diri dari militer Indonesia atau hidup di bawah kekuasaan Fretilin, jumlah kematian paling besar terjadi di bulan-bulan terakhir sebelum penyerahan diri, disebabkan karena pengeboman Indonesia dan karena kelaparan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan kelaparan.

39. Antara pertengahan 1977 dan akhir 1978, militer Indonesia meluncurkan kampanye militer untuk menghancurkan resistansi, menguasai berbagai wilayah di luar kekuasaan, mereka dan memaksa penduduk yang berdiam di berbagai wilayah tersebut untuk menyerah. Sebelum meluncurkan kampanye 'pengepungan dan penghancuran' pasukan Indonesia secara konstan melakukan gangguan terhadap penduduk, memaksa mereka berpindah berkali-kali. Pelarian diri ini biasanya berakhir dengan ribuan orang terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu, seperti Gunung Matebian, Dataran Natarbora, Fatubessi di Ermera, Gunung Ilimanu di Manatuto, dan daerah pesisir Alas di Manufahi serta Beco dan Halik di Covalima, ketika mereka dibom secara intens dari darat, laut, dan udara.
40. Seiring dengan meningkatnya intensitas operasi militer Indonesia di beberapa wilayah, banyak orang yang terus bergerak untuk menghindari kematian, cedera, atau penangkapan. Ketika sedang melarikan diri dari serangan Indonesia, banyak orang sipil Timor-Leste yang mati karena perampasan penghidupan—akibat kelaparan, kelelahan, dan kekurangan akses terhadap perawatan medis. Hidup di dalam pelarian berarti mengolah sumber bahan pangan juga menjadi mustahil.
41. Dalam berbagai serangan mereka terhadap basis resistansi atau pelarian kelompok penduduk, pasukan Indonesia tidak membedakan antara orang sipil ataupun petempur. Banyak penduduk sipil yang terbunuh di berbagai serangan ini.
42. Seiring dengan besarnya konsentrasi penduduk yang diserang, sumber makanan liar dan sumber air alami yang menjadi satu-satunya penghidupan mereka sering tercemar. Pada banyak kasus, di mana para saksi melaporkan kontaminasi tersebut, kelihatan bahwa hal itu akibat pengeboman terus-menerus. Tapi, dalam satu kejadian, ada dugaan bahwa serangan Indonesia terhadap Lesumau di Ermera pada pertengahan 1978 menggunakan bom beracun sehingga mencemari sumber makanan dan minuman di wilayah itu.
43. Kelaparan mulai muncul di Timor-Leste sekitar akhir 1977 dan akhir 1978—maksudnya kematian karena kelaparan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengannya mulai bermunculan di dalam skala besar pada masa itu. Kondisi ini muncul kuat di kalangan orang pelarian dan sejumlah besar orang yang tergusur ke berbagai wilayah tertentu di mana pengepungan pasukan Indonesia menghalangi pergerakan mereka, bahkan pergerakan untuk mencari makan. Pada masa ini, kelaparan merupakan akibat langsung operasi militer, bukan akibat kekeringan alami.

Kamp dan permukiman di bawah kontrol militer Indonesia

508. Komisi menemukan bahwa:

44. Orang-orang yang menyerah atau ditangkap militer Indonesia diharuskan tinggal di berbagai kamp sampai bertahun-tahun. Berbagai kamp ini diawasi dan dimonitor dengan ketat oleh pihak militer. Kamp ini diciptakan untuk alasan keamanan, bukan untuk kesejahteraan penduduknya.
45. Penduduk sipil yang menyerah atau ditangkap pertama-tama dibawa ke dalam kamp transit atau kamp penampungan sementara untuk proses registrasi dan interogasi, sebelum dipindahkan ke dalam kamp pengasingan dan kemudian ke berbagai desa sasaran perpindahan. Walaupun kontrol keamanan berkurang di setiap tahap, yang menegaskan ciri semua kamp tersebut adalah sedikit atau tidak adanya akses menuju kebun yang terletak lebih jauh daripada suatu jarak tertentu dari berbagai permukiman ini.
46. Militer Indonesia memberi prioritas lebih tinggi kepada pencapaian berbagai tujuan militer daripada memenuhi kewajiban kemanusiaannya terhadap penghuni kamp-kamp ini. Sejak kamp ini mulai diciptakan, persediaan kebutuhan dasar kehidupan di dalam berbagai kamp ini sangatlah tidak mencukupi.
47. Berbagai kamp ini menjadi situs untuk kasus kelaparan tingkat tinggi di mana jumlah kematian yang terjadi tidak diketahui. Berada dalam kondisi yang sudah sangat lemah ketika memasuki kamp, para penduduk sipil mengalami masa berkepanjangan tanpa akses kepada makanan, lahan berkebun, atau bantuan kemanusiaan darurat. Makanan yang mereka terima dari militer sangatlah tidak mencukupi untuk menghidupi mereka. Makanan tersebut juga sering tidak cocok untuk orang-orang yang sudah mengalami malnutrisi parah. Bahkan jatah makanan yang sudah sangat kurang ini masih juga dibagikan secara diskriminatif. Komisi mengetahui bahwa untuk mengganti makanan, militer dan para pendukungnya meminta uang, warisan keluarga, dan berbagai barang berharga lainnya (emas dan manik-manik tradisional), dan “hadiah” seksual.
48. Walaupun kampanye militer yang dijalankan militer Indonesia pada 1977-78 memiliki sasaran yang persis sama dengan hasil yang diraih—yaitu penyerahan diri secara massal penduduk yang berada di bawah kekuasaan Fretilin ke dalam wilayah kekuasaan Indonesia—pihak berwajib Indonesia membuat sedikit atau tidak ada samasekali persiapan untuk memenuhi kebutuhan paling esensial penduduk untuk bernaung, makan, dan berobat. Pada tahap awal kampanye ini, pastilah terlihat bagi militer Indonesia bahwa populasi yang melakukan penyerahan diri ini dalam kondisi sangat lemah dan sangat membutuhkan berbagai kebutuhan esensial tersebut untuk bisa terus hidup. Namun, ketimbang menciptakan kondisi yang bisa menghindarkan kelaparan lebih lanjut, militer Indonesia malah mengabaikan berbagai kebutuhan dasar penduduk yang menyerahkan diri dan menetapkan larangan dan hukuman atas mereka, yang memperparah keadaan mereka yang sudah sangat buruk.

49. Skala kelaparan pada pertengahan hingga akhir 1979 dan fakta bahwa kelaparan ini terus semakin parah dapat dilihat dari berbagai laporan perwakilan bantuan internasional pada waktu itu. Dari hasil survei pada April 1979 Catholic Relief Services dari Amerika Serikat memperkirakan bahwa 200.000 orang berada dalam “kondisi kekurangan gizi pada tingkat serius atau kritis”. Pada September 1979 mereka menemukan bahwa jumlah orang yang berada di dalam kondisi ini mendekati jumlah 300.000. Palang Merah Internasional mendeskripsikan 60.000 dari 75.000 orang yang mereka survei pada Juli 1979 berada “di dalam kondisi kekurangan gizi yang mengkhawatirkan” termasuk “20.000 hampir mati karena kelaparan.”⁵¹⁵

Bantuan kemanusiaan

509. Komisi menemukan bahwa:

50. Pemerintah Indonesia menolak memberikan izin kepada setiap lembaga bantuan kemanusiaan internasional untuk beroperasi di Timor-Leste dari hari invasinya pada 7 Desember 1975 sampai akhir 1979. Tidak bisa dipungkiri bahwa pihak berwajib dari militer Indonesia di Timor-Leste mengetahui tentang meningkatnya jumlah kematian yang disebabkan kelaparan di berbagai kamp yang berada di bawah kekuasaan mereka.
51. Dari setidaknya akhir 1976, pemerintah Indonesia mengizinkan bantuan makanan untuk sampai ke tangan orang-orang di berbagai kamp yang berada di bawah kekuasaannya melalui Palang Merah Indonesia dan Gereja Katolik. Semua laporan kepada Komisi menunjukkan bahwa bantuan ini terlalu sedikit atau terlalu terlambat untuk mencegah kelaparan di dalam beberapa kamp antara tahun 1977 dan 1979. Sejumlah usaha Gereja Katolik untuk menyediakan lebih banyak lagi bantuan dan untuk menangani atau mengawasi pembagiannya secara sistematis digagalkan.
52. Laporan mengenai kematian karena kejutan protein (*protein shock*) setelah menerima bantuan makanan, dan pengamatan yang hampir universal para mantan tahanan bahwa nasi dan jagung yang mereka terima sudah basi, menunjukkan ketidakmampuan pihak berwajib Indonesia untuk menangani bantuan terhadap kelaparan.
53. Laporan mengenai kelaparan sampai ke lembaga bantuan internasional menjelang April 1977, dan hal ini mendorong permintaan terhadap pemerintah Indonesia agar lembaga-lembaga ini diperbolehkan masuk ke wilayah bersangkutan. Kunjungan Tingkat Tinggi oleh sembilan duta besar luar negeri pada September 1978 ke berbagai kamp pemindahan di Timor-Leste meningkatkan kesadaran internasional akan kebutuhan program bantuan kemanusiaan yang besar. Namun pemerintah Indonesia tidak mengizinkan perwakilan internasional beroperasi di Timor-Leste sampai 12 bulan sesudahnya.

54. Penolakan pemerintah Indonesia untuk memperbolehkan program bantuan internasional masuk, walaupun kebutuhan untuk itu sudah diketahui secara internasional, hampir bisa dipastikan karena ketidakinginan militer Indonesia akan keberadaan saksi atau halangan lain dalam kampanye mereka untuk menjadikan penduduk patuh di bawah kekuasaan mereka dan untuk melemahkan resistansi. Komisi memercayai bahwa waktu diambilnya keputusan memperbolehkan CRS dan ICRC untuk melakukan penelitian di Timor-Leste, pada April dan Juli 1979, kemudian memperbolehkan lembaga-lembaga tersebut untuk beroperasi pada 1979, sangatlah sugestif. Yang telah berubah pada waktu itu bukanlah perubahan skala kelaparan menjadi sangat besar—hal ini sudah diketahui beberapa bulan sebelumnya—tapi karena militer Indonesia memercayai bahwa kampanye untuk menghancurkan resistansi pada dasarnya sudah selesai.
55. Sesudah diperbolehkan masuk, organisasi bantuan Internasional masih juga dibatasi dalam beroperasi. Mereka diizinkan memiliki sedikit saja pegawai non-Indonesia di wilayah kerja di Timor-Leste. Mereka sering menghadapi hambatan melakukan pekerjaannya di berbagai tempat bekerja yang kondisinya sudah sangat menyulitkan. Mereka tidak diperbolehkan mengirimkan bantuan ke wilayah yang berada di luar kekuasaan militer Indonesia.
56. Operasi bantuan internasional yang dimulai pada akhir 1979 menjangkau kebanyakan penduduk di berbagai kamp dan orang-orang lainnya yang membutuhkan. Operasi ini telah mengurangi kelaparan yang terjadi di seluruh Timor-Leste.
57. Komisi menerima bukti dari masyarakat Timor-Leste yang sudah bekerja dengan lembaga bantuan internasional, dari orang-orang yang bekerja dengan gereja, dan orang-orang yang seharusnya menjadi target bantuan bahwa secara rutin bantuan ini dialihkan dari target seharusnya, untuk dijual demi kepentingan pribadi atau digunakan untuk penggunaan pribadi oleh pihak militer Indonesia dan beberapa staf dari lembaga bantuan tersebut.

Desa relokasi strategis dan penginterniran

510. Komisi menemukan bahwa:
 58. Mulai dari awal dasawarsa 1980-an pihak berwajib Indonesia memperkenalkan berbagai bentuk baru pemindahan. Hal ini berhubungan dengan dua jenis perkembangan. Yang pertama adalah keputusan untuk membongkar atau memperkecil kamp-kamp perpindahan yang sudah dibangun untuk menampung populasi yang melakukan penyerahan diri pada akhir dasawarsa 1970-an. Yang kedua adalah pengorganisasian ulang yang dilakukan oleh Resistansi sebagai pasukan gerilya yang mampu melakukan berbagai penyerangan terlokalisasi terhadap ABRI.
 59. Untuk banyak orang, keputusan untuk memindahkan mereka keluar dari kamp perpindahan tidak membawa perbaikan yang nyata atas kondisi

kehidupan mereka. Ada beberapa aspek positif, terutama di dalam penyediaan sekolah, klinik, pasar, dan akses yang lebih mudah kepada alat-alat transportasi. Namun Komisi mendapatkan banyak bukti bahwa setidaknya di dalam paruh pertama dasawarsa 1980-an, tahap pemindahan ini sering dikelola dengan cara yang memastikan agar orang-orang yang menjadi korban pemindahan tidak akan bisa menikmati berbagai keuntungan yang bisa didapatkan dari program baru ini. Lagi-lagi, ini ialah program yang melayani kepentingan militer, tapi tidak menjamin keselamatan. Untuk banyak orang yang dipindahkan, transfer mereka dari kamp perpindahan ke berbagai desa strategis baru, dan bahkan ke desa asal mereka sendiri, tidak memperbaiki kondisi mereka secara substansial. Pembatasan atas kebebasan bergerak terus memiliki pengaruh serius terhadap produksi makanan dan terhadap kesejahteraan masyarakat.

60. Selain itu, bahkan setelah berbagai kamp perpindahan dibongkar, pola permukiman di Timor-Leste tetaplah berbeda secara radikal dari pola yang ada sebelum invasi. Bahkan sampai saat ini masih ada tanda-tanda yang bisa terlihat. Banyak orang dipaksa tinggal di berbagai kota dan sepanjang jalan besar. Banyak wilayah subur ditinggalkan.
61. Pemindahan yang dilakukan sebagai respons terhadap tanda-tanda bahwa resistansi telah berhasil selamat dari penghancuran markas mereka sangatlah berciri hukuman. Berbagai pemindahan ini mengambil tempat setelah serangan gerilya, pembelotan ke pasukan Resistansi oleh masyarakat Timor-Leste yang sebelumnya telah didaftarkan ke dalam pasukan pertahanan sipil Indonesia, dan penegakan jaringan pendukung klandestin. Sejumlah pemindahan ini melibatkan penghukuman kolektif kepada seluruh komunitas dan hukuman 'terwakili' yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan mereka yang masih bertempur di pedalaman dan di hutan.
62. Dihitung secara kumulatif, lebih daripada 6.000 orang menjadi korban pemindahan paksa ke Pulau Ataúro antara pertengahan 1980 dan 1984. Pada puncaknya di akhir 1982, populasi yang menjadi korban pemindahan ini melebihi 4.000 orang. Kebanyakan orang yang dikirim ke pulau ini bukanlah aktivis politik maupun tentara resistansi, tetapi orang dari 12 distrik yang memiliki hubungan keluarga atau memiliki kontak dengan para tentara resistansi yang masih ada di hutan. Mereka kebanyakan terdiri atas perempuan dan anak-anak, dan mereka mengalami kesulitan luarbiasa untuk bertahan di dalam wilayah yang sangat tandus ini. Mereka ditahan di pulau untuk waktu yang berjangka dari beberapa bulan sampai enam tahun. Mereka yang datang pada gelombang pertama pemindahan paksa tidak diberi makanan atau dukungan lain yang mencukupi. Militer Indonesia juga melalaikan kewajiban mereka untuk menyediakan perawatan medis, air bersih, sanitasi, dan tempat bernaung. Sekitar lima persen dari orang-orang yang menjadi korban pemindahan di Ataúro meninggal di sana. Beberapa mampu bertahan karena menerima pertolongan dari penduduk

lokal, walaupun jumlah orang yang masuk tidak jauh berbeda dari jumlah total penduduk asli dan memberi beban yang tidak bisa didukung oleh sumberdaya alam di pulau tersebut. Keadaan membaik ketika ICRC/ Palang Merah Internasional diperbolehkan masuk pada 1982. Ketika orang-orang dilepaskan dari Ataúro, beberapa hanya dipindahkan ke berbagai wilayah lain untuk pengasingan lebih lanjut .

63. Beberapa yang ditahan setelah serangan oleh anggota resistansi atas pos-pos dan unit-unit militer juga dikirim ke Ataúro. Yang lainnya menjadi korban pemindahan dari desa asal mereka dan dikirim ke berbagai tempat di mana mereka harus membangun ulang hidup mereka tanpa bantuan apapun di lingkungan yang sangat tidak bersahabat. Ini adalah nasib banyak penduduk desa di Ainaro dan Manufahi yang terlibat di dalam pemberontakan Kablaki pada Agustus 1982, dan kebanyakan perempuan yang selamat dari pembunuhan massal setelah pemberontakan Kraras (Viqueque) pada Agustus 1983. Grup kedua ini dikirim ke tempat yang belum pernah dihuni siapapun sebelumnya di Lalerek Mutin di mana mereka terpaksa mempertahankan hidup di bawah pengamatan ketat militer. Penduduk Lalerek Mutin mengalami sejumlah kejahatan seksual, orang hilang, kelaparan, penyakit, dan kematian. Perlakuan terhadap mereka sangat serupa dengan perlakuan yang diterima oleh penduduk dari Ainaro yang telah dipindahkan ke Desa Raifusa dan Dotik di Distrik Manufahi satu tahun sebelumnya.

Pemindahan sebelum dan sesudah Jajak Pendapat 1999

511. Komisi menemukan bahwa:

64. Ada hubungan langsung antara pembentukan milisi antikemerdekaan di Timor-Leste dari akhir 1998 dan peningkatan jumlah kekerasan yang menyebabkan rasa takut, pemindahan, perampasan penghidupan, dan kematian.
65. Rasa takut tersebut didorong oleh pengetahuan masyarakat bahwa, walaupun seperti disebutkan di dalam Perjanjian 5 Mei bahwa Pemerintah Indonesia wajib menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman untuk Jajak Pendapat, berbagai kelompok milisi memiliki dukungan dari TNI dan berbagai elemen pemerintahan lain, dan bersandar pada dasar tersebut memiliki kekebalan hukum atas berbagai tindakan mereka. Kebanyakan tindakan kekerasan dan intimidasi di Timor-Leste pada 1999 dilakukan oleh para anggota milisi dan bukan anggota militer Indonesia. Namun, kebanyakan tindak kekerasan ini terjadi dengan kehadiran militer atau polisi Indonesia yang tidak bertindak apapun untuk mencegah berbagai tindakan tersebut. Orang-orang yang mencari perlindungan polisi dari tindakan kekerasan milisi, tidak mendapatkan bantuan.
66. Ada bukti kuat bahwa sejumlah kelompok milisi secara paksa merekrut orang untuk menjadi anggota mereka. Satu alasan mengapa orang-orang melarikan diri dari kediaman mereka ialah karena mereka ingin menghindari hal ini.

67. Tindakan kekerasan milisi sebelum Jajak Pendapat mencapai puncaknya pada April 1999 dengan berbagai serangan yang terjadi di banyak tempat, pembantaian di Gereja Liquiça, dan pelarian diri spontan banyak orang. Mereka mencari tempat untuk mengungsi di sejumlah lokasi terpencil di daerah pedalaman, dengan keluarga mereka di wilayah lain dan di kompleks gereja. Beberapa orang, dari distrik-distrik bagian barat, menyeberangi perbatasan ke Timor Barat, Indonesia.
68. Tujuan tindakan kekerasan milisi adalah untuk mendapatkan kemenangan mayoritas untuk pilihan otonomi dalam pemilihan suara 30 Agustus. Pada persiapan menuju Jajak Pendapat mereka menggunakan kekerasan tanpa pandang bulu untuk mengamankan kemenangan tersebut. Maka, walaupun mereka menargetkan orang-orang yang secara dikenal luas sebagai orang yang prokemerdekaan, seperti para pemimpin CNRT dan anggota organisasi siswa prokemerdekaan, masyarakat sipil, dan seluruh anggota komunitas, serta mereka yang menawarkan perlindungan terhadap komunitas-komunitas ini, termasuk gereja, juga menjadi korban mereka. Satu renungan dari berbagai prioritas ini ialah bahwa milisi (dan TNI) tidak terlibat secara militer melawan pasukan Falintil.
69. Di bawah ancaman kekerasan tanpa pandang bulu dari berbagai kelompok milisi, banyak orang menjauhi tempat kediaman biasa mereka. Diperkirakan 60.000 orang menjadi korban pemindahan. Banyak yang kembali hanya untuk mendaftar atau memilih sebelum kemudian kembali ke tempat pengungsian.
70. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang menjadi korban pemindahan dan mengungsi dalam jumlah besar ke tempat di mana mereka berharap dapat memperoleh keselamatan, kondisi kehidupan mereka memburuk, dalam beberapa kasus menjadi sangat genting.
71. Pihak berwajib Indonesia dan sekutu milisi mereka menggunakan berbagai cara, termasuk penghalangan birokrasi dan kekerasan, untuk menggagalkan usaha-usaha organisasi nonpemerintah lokal, didukung oleh UNAMET dan perwakilan PBB, untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang menjadi korban pemindahan.
72. Kondisi keamanan yang menyedihkan dan pelarian diri orang dalam jumlah besar pada 1998 dan 1999 mengganggu penanaman bahan pangan. Ini memperburuk kekurangan makanan yang disebabkan oleh panen buruk pada 1998 yang disebabkan oleh curah hujan rendah.
73. Taktik 'bumi hangus' menyeluruh yang digunakan TNI dan kelompok-kelompok milisi setelah Jajak Pendapat, ditandai dengan ancaman kekerasan, pembunuhan, deportasi paksa massal, dan penghancuran sejumlah bangunan milik publik maupun pribadi di seluruh wilayah Timor-Leste, menyebabkan kebanyakan penduduk sipil mengalami pemindahan, internal maupun eksternal.

74. Sekitar 250.000 orang dipindahkan ke Timor Barat sesudah pemungutan suara. Rencana terperinci untuk pengungsian besar-besaran, melibatkan beberapa anggota kementerian Pemerintah Indonesia, sudah dibuat jauh hari sebelum Jajak Pendapat. Kebanyakan orang dipaksa pindah, ini berarti kekerasan atau ancaman kekerasan dipakai untuk memastikan agar mereka patuh pada keinginan pihak berwajib Indonesia yang mengharuskan mereka meninggalkan Timor-Leste.
75. Orang Timor-Leste yang tinggal di berbagai kamp dan tempat lainnya di Timor Barat, tempat mereka mengungsi, masih berhadapan dengan kontrol, intimidasi, dan kekerasan dari para anggota milisi. Banyak yang ingin kembali ke Timor-Leste, tetapi dihalang-halangi dengan kombinasi ancaman dan informasi yang menyesatkan dari para anggota milisi.
76. Walaupun berbagai lembaga bantuan internasional mampu membagikan bantuan kemanusiaan kepada korban pemindahan, mereka juga dihadapi dengan kontrol, intimidasi, penyerangan, dan pembunuhan oleh para anggota milisi.

Catatan Akhir

1. *ICC Elements of Crimes, Adopted by the Assembly of State Parties*, ICC-ASP/1/3, Pasal 7(1)(d), hal.118. Definisi ini, diambil dari versi rancangan dari *Elements of Crimes*, disetujui oleh ICTY di dalam *Prosecutor v Radislav Krstic*, Kasus ICTY No IT-98-33-T, *Trial Chamber Judgment*, 2 Agustus 2001, Paragraf 529; dan di dalam *Prosecutor v Milomir Stakić*, Kasus ICTY No IT-97-24-T, *Trial Chamber Judgment*, 31 Juli 2003, Paragraf 682.
2. *ICC Elements of Crimes, Adopted by the Assembly of State Parties*, ICC-ASP/1/3, Pasal 7(1)(d), hal. 118.
3. *ICC Elements of Crimes, adopted by the Assembly of State Parties*, ICC-ASP/1/3, Pasal 7(1)(d), 8 (2) (a) (vii)-1, 8 (2) (b) (viii) dan 8 (2) (e) (viii), pp.118, 130, 136 dan 154.
4. Pasal 13(1) UDHR dan Pasal 12(1) ICCPR.
5. Pasal 12(3) ICCPR; HRC General Comment No 27, paragraf 11, 14 dan 15.
6. Prinsip nomor 6, *UN Guiding Principles on Internal Displacement*, E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 Februari 1998.
7. Lihat, contohnya: Prinsip 7(2), 18 dan 25, *UN Guiding Principles on Internal Displacement*, E/ CN.4/1998/53/Add.2, 11 Februari 1998
8. Pasal 49 Konvensi Jenewa IV.
9. Pasal 49 Konvensi Jenewa IV.
10. Pasal 147 Konvensi Jenewa IV.
11. Pasal 25 Hague Regs; Pasal 27 Konvensi Jenewa IV; Pasal 51 dan 52 Protokol Jenewa I.
12. Pasal 51(4) dan (5) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1996) ICJ Reports paragraf 78.
13. Pasal 33 Konvensi Jenewa IV; Pasal 51(2) Protokol Jenewa I.
14. Lihat cuplikan dari John Osgood Field, *The challenge of famine*, Kumarian Press, Connecticut, 1993 di <http://www.ucc.ie/research/famine/About/abfamine.htm> pada 26 Maret 2005
15. Amartya Sen, *Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation*, 1981, p 40.
16. Pasal 25(1) UDHR dan Pasal 11(1) ICESCR.
17. Pasal 11(2) ICESCR.
18. CESCR General Comment No 12 para 8.

19. HRC General Comment No 6, paragraf 5.
20. ICESCR General Comment No 12, paragraf 14.
21. ICESCR General Comment No 15, paragraf 3; Pasal 11(1) ICESCR.
22. Pasal 25(1) UDHR; Pasal 11(1) ICESCR; CESCR General Comment No 4.
23. ICESCR General Comment No 12, paragraf 19.
24. Pasal 3 UDHR, Pasal 6 ICCPR.
25. Pasal 54, Protokol I dari Protokol Tambahan 1997 atas Konvensi Jenewa dan Pasal 8 (2) (b) (xxv), ICC Elements of Crimes. adopted by the Assembly of State Parties, ICC-ASP/1/3, hal. 144.
26. Pasal 7 (1) (b), ICC Elements of Crimes. adopted by the Assembly of State Parties, ICC-ASP/1/3, hal. 116.
27. Pasal 55 Konvensi Jenewa IV; lihat juga Pasal 56 Konvensi Jenewa IV mengenai perlakuan medis dan pasal 59-62 mengenai penerimaan bantuan.
28. Profil Komunitas CAVR, Suco Profil Komunitas CAVR, Suco Tasi, Vemasse, Baucau 28 Maret 2003; Profil Komunitas CAVR, Suco Profil Komunitas CAVR, Suco Bahamori, Venilale, Baucau, 29 Mei 2003; Profil Komunitas CAVR, Suco Mape, Zumalai, Covalima, 15 Juni 2003.
29. Profil Komunitas CAVR, Suco Bemori, Dili, 29 Mei 2003
30. Memorandum oleh A. Pasquier kepada ICRC Jenewa berjudul "International Committee of the Red Cross, East Timor Relief Operation, Concerning: Situation in Timor, Report of the Activities of the Delegation from 1 to 15 September." Disusun di Darwin, 16 September, 1975.
31. Polisi Sipil PBB, Investigasi Nasional wawancara dengan Paulo Fatima Martins, 25 Oktober 2000.
32. Wawancara CAVR dengan Rui Emiliano T. Lopes, João Sereno dan Nito Lopes, Kamenasa, Suai, 26 Maret 2003
33. Profil Komunitas CAVR, Suco, Odoumau, Bobonaro 3 Maret, 2003.
34. Profil Komunitas Profil Komunitas CAVR, Suco Aitoum, Beidasi, Covalima, 17 October 2002.
35. Profil Komunitas CAVR, Suco, Lela, Covalima, 18 Februari 2003.
36. Profil Komunitas Profil Komunitas CAVR, Suco Ritabou, Bobonaro, 10 Februari 2003.
37. Profil Komunitas CAVR, Suco, Holsa, Bobonaro, 14 Maret 2003.
38. Profil Komunitas CAVR, Suco, Memo, Bobonaro, 22 Januari 2003.
39. Profil Komunitas CAVR, Suco, Raifun, Bobonaro, 3 Februari 2003.
40. Profil Komunitas CAVR, Suco, Vaviquinia, Liquisa, 3 Juli 2003.
41. Profil Komunitas CAVR, Suco, Leimea Sorin Balu, Ermera 21 Oktober 2002.
42. Pernyataan HRVD 07025
43. Pernyataan HRVD 02450
44. Pernyataan HRVD 02473
45. Wawancara CAVR dengan João Carrascalão, Dili, 30 Juli 2004.
46. Pastor Francisco Fernandes dan Pastor Apolinario Guterres, Pernyataan yang disampaikan kepada Komite Keempat Sidang Umum PBB mewakili *Comissão dos Refugiados de Timor Oriental*, 26 Oktober 1979.
47. Tomás Gonçalves, kesaksian oral kepada Audiensi Publik CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 18 Desember 2003
48. Seperti dikutip dalam Richard Woolcott, *The Hot Seat*, hal. 156.
49. Situasi di Timor, Laporan mengenai kegiatan delegasi sejak tanggal 1-15 September untuk ICRC Jenewa. 16 September 1975.
50. Teleks dari Testuz, Jakarta 29 September 1975 untuk Pasquier, Palang Merah Darwin.
51. Submisi CRS untuk CAVR, hal. 17
52. Teleks dari ICRC untuk CRS pada 31 Oktober 1975.
53. Teleks dari Testuz, Jakarta 29 September 1975 untuk Pasquier, Palang Merah Darwin
54. Wawancara CAVR dengan Nito Lopes, Kamenasa, Suai, 26 Maret 2003
55. *ibid*
56. Hasil wawancara CAVR dengan Rui Lopes, Kamenasa, Suai 26 Maret 2003
57. National Security Archives, Surat dari José Martins untuk Sekretaris Jenderal PBB, seperti disampaikan kepada Menteri Luar Negeri oleh Perwakilan AS untuk PBB pada bulan Mei 1976 (Nomor Dokumen: 1976USUNNO1891).

58. Pastor Francisco Fernandes dan Pastor Apolinario Guterres, Pernyataan yang disampaikan kepada Komite Keempat Sidang Umum PBB, hal. 2-3.
59. Wawancara CAVR dengan Rui Lopes, Kamenasa, Suai, 26 Maret 2003
60. Pernyataan HRVD 02491
61. Program bantuan ICRC di bagian Timur-Timor, André Pasquier, 24 November 1975
62. Memorandum oleh A. Pasquier untuk ICRC Jenewa menugasi Operasi Bantuan Timor-Timur, Komite Palang Merah Internasional, Berkaitan dengan: Situasi di Timor, Laporan tentang berbagai aktivitas delegasi sejak tanggal 1-15 September. Tertanggal, Darwin, 16 September 1975.
63. Catatan ICRC mengenai pembahasan melalui telepon terkait Timor Portugis, 12 September 1975 ; Berbagai diskusi antara LG Stubbings, Pasquier dan JT Ferwerda Darwin 6-7 November 1975.
64. Catatan ICRC mengenai percakapan telepon dengan Pasquier, 21 November 1975.
65. Pernyataan HRVD 03788
66. Pernyataan HRVD 00606
67. Pernyataan HRVD 03412
68. Pernyataan HRVD 09071
69. Perdebatan dalam Dewan Keamanan PBB berkaitan dengan Timor -Timur, pidato oleh K.L. Fry, MP April 1976, berdasarkan hasil kunjungannya ke Timor Timur pada pertengahan bulan September 1975; Telegram dari Jose Ramos Horta (Sekretaris Jenderal Komite Sentral Fretilin) untuk ACFOA, 24 September 1975.
70. Wawancara CAVR dengan Benvinda G.D. Lopes, Suco Darabai, Uatolari, Viqueque, 16 September 2003.
71. CAVR Profil Komunitas Suco Wailili, Baucau Kota, Baucau, 28 Oktober 2003
72. Manuel Carceres da Costa, dalam Audensia Publik tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan di CAVR Dili, 28-29 Juli 2003
73. Wawancara CAVR dengan Francisco Bernardino Soares, Ermera Kota, Ermera, 10 September 2003.
74. José Sereno, Maria José da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, Dili, 28-29 Juli 2003.
75. Profil Komunitas CAVR, Suai Loro, Suai, Covalima, 10 Desember 2003.
76. Wawancara CAVR dengan Saturnino Tilman, Letefoho, Same, Ermera, 23 Februari 2003.
77. Profil Komunitas CAVR, Coliate, Subdistrik Hatolia, Distrik Ermera, 1 September 2003.
78. Wawancara CAVR dengan Fernando Amaral, Fuat, Iliomar, Lautém, 28 Mei 2003; Juga Mateus Miranda dalam wawancara dengan CAVR, SMP I Iliomar, 29 Mei 2003. Ia menjelaskan, "Orang-orang melihat kedatangan TNI (di Uato Carbau pada Februari 1977) dan mereka segera memberitahu yang lainnya, jadi kami semua mengungsi ke hutan, alasannya adalah kami telah patah semangat untuk membantu Resistansi memerangi musuh."
79. Wawancara CAVR dengan Mario Nicolau dos Reis, CAVR Office, 19 Juni 2003
80. CAVR Profil Komunitas, Suco Defawasi (Baguia, Baucau) 23 September 2003
81. CAVR Profil Komunitas, Caisido, Baucau Kota, Baucau [tak bertanggal]
82. CAVR Profil Komunitas, Bidau Santana/Bidau Meti-Aut, Cristo Rei, Dili [tak bertanggal]
83. CAVR Profil Komunitas, Buruma (Baucau, Baucau), 2 Desember 2003
84. Wawancara CAVR dengan Alvaro dos Santos 28 September 2003
85. Wawancara CAVR dengan Paulino da Costa Neves, Beikala, Hato Udo, Ainaro, 20 Desember 2003
86. Wawancara CAVR dengan Suster Consuela Martinez, Klinik Bebonuk, Dili, 4 Juli 2003.
87. Ibid.
88. Gilman dos Santos, kesaksian di Audiensi Publik tentang Kelaparan dan Pemindahan Paksa, di CAVR Dili, 28-29 Juli 2003
89. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Palácio das Cinzas, Dili, 7 Juli 2004.
90. Wawancara CAVR dengan Cosme Freitas, Vemasse, Baucau, 10 April 2003.
91. Ibid.
92. Ibid.
93. CAVR Laporan Penelitian tentang Suai 24-28 Maret 2003
94. Ibid.
95. Wawancara CAVR dengan João Sereno, 25 Maret 2003.

96. Ibid.
97. CAVR Wawancara dengan Bonfacio Reis, Hatolia, Ermera, 13 Agustus 2003, Sebastião da Silva, Ossu, Viqueque, Juni 2003, Julio de Maria de Jesus, 29 Mei 2003
98. Maria José da Costa Letefoho, Same, Manufahi, 24 Februari 2003
99. CAVR Orifuk Jinybutas Baguia Laveteri, Subdistrik Baguia, Distrik Baucau, 9 Oktober 2003
100. Wawancara CAVR dengan Eduardo de Deus Barreto, Gleno, Ermera, 24 November 2003
101. CAVR Profil Komunitas Defawasi, Baguia, Baucau, 23 September 2003
102. CAVR Profil Komunitas Ahic, , Lacluta, Viqueque, 22 November 2002
103. HRVD Pernyataan 02005
104. HRVD Pernyataan 02054
105. Pernyataan HRVD 06080.
106. Pernyataan HRVD 00522.
107. Pernyataan HRVD 03403.
108. Pernyataan HRVD 03409.
109. Wawancara CAVR dengan Luis Casmiro Martins; Submisi kepada CAVR, "Dadus ema nebe mate tan moras, hamlaha, bubu, bonbardeamento etc, iha Hatolia ho fatin seluk tan durante funu nia laran" ["Data orang yang meninggal dunia karena sakit, kelaparan, bengkak, pemboman, dan sebagainya di Hatolia dan tempat lain di masa perang"], 29 September 2003.
110. Pernyataan HRVD 5762.
111. Pernyataan HRVD 0160.
112. Pernyataan HRVD 02056.
113. HRVD Pernyataan 03160
114. Wawancara CAVR dengan Elias Quintão, Hato Udo, Ainaro, 18 Desember 2003
115. Francisco Xavier do Amaral dalam Audiensi Publik tentang Konflik Internal di CAVR Dili, Desember 2003, di CAVR Dili, 15-18 Desember 2003
116. CAVR Profil Komunitas Hoholau, Aileu Kota, Aileu, 20 Februari 2004
117. CAVR Profil Komunitas Lausi/Bandudato, Aileu Kota, Aileu, 16 Februari 2004
118. HRVD Pernyataan 0162
119. HRVD Pernyataan 5222.
120. HRVD Pernyataan 0431.
121. Kesaksian Manuel Carceres da Costa untuk Audiensi Publik tentang Pindahan dan Kelaparan, di CAVR Dili, 28-29 Juli 2003
122. HRVD Pernyataan 0583.
123. HRVD Pernyataan 3090.
124. HRVD Pernyataan 7336.
125. Wawancara CAVR dengan Francisco Barbosa, Manumera, Turiscai, Manufahi, 11 September 2003.
126. HRVD Pernyataan 4195.
127. HRVD Pernyataan 4045.
128. HRVD Pernyataan 2250.
129. HRVD Pernyataan 3116.
130. HRVD Pernyataan 5443.
131. Wawancara dengan Pe. Locatelli, Fatumaca, Baucau, 8 April 2003
132. Dokumen Penelitian CAVR; Wawancara CAVR dengan Saturnino Tilman, Alas, Manufahi , 25 Februari 2003 Mateus da Conceicao, Alas, Manufahi , 25 Februari 2003 Elias Barreto, , Alas, Manufahi , 25 Februari 2003 dan Maria José da Costa, Letefoho, Same, Manufahi, 24 Februari 2003
133. Wawancara CAVR dengan Carmen da Cruz, kantor CAVR, 27 Februari 2004.
134. Wawancara CAVR dengan Rui Lopes, Camenassa, Suai, Covalima, 26 Maret 2003.
135. Ibid.
136. Wawancara CAVR dengan Carmen da Cruz, kantor CAVR, Dili, 27 Februari 2004.
137. Wawancara CAVR dengan Cosme Freitas, Vemasse, Baucau, 10 April 2003
138. CAVR Profil Komunitas, Suco Liurai, Turiscai, Manufahi, 17 September 2003.
139. Wawancara CAVR dengan Tomas Barbosa, Foholau, Turiscai, Same, September 9 2003.

140. Lihat, misalnya, CAVR Profil Komunitas, Suco Benamauk, Camea and Fatuahi, Cristo Rei.
141. CAVR Profil Komunitas Benamauk, Camea dan Fatuahi, Cristo Rei.
142. Dokumen Penelitian CAVR; Wawancara CAVR dengan Horacio da Silva, Ossu-Kota, Viqueque, 6 April 2003
143. CAVR Profil Komunitas Puno, Paraira, Moro.
144. Ernest Chamberlain, *The Struggle in Iliomar: Resistance in Rural East Timor*, hal.13.
145. Laporan Penelitian CAVR tentang Iliomar, p.4., 24 Mei-1 Juni 2003
146. Sarah Niner (ed.), *To Resist is to Win! The Autobiography of Xanana Gusmão*, hal.55: Aurora Books, 1994, p.55) Aslinya: Xanana Gusmão, Timor-Leste Um Povo, Uma Pátria, p.39
147. Wawancara CAVR dengan Horacio da Silva, Ossu-Kota, Viqueque, 6 April 2003
148. Wawancara CAVR dengan Leonel Guterres, Letemumo, Quelicai, Baucau, 8 April 2003
149. Fransisco Soares Pinto, Wakil Kepala Desa Cainliu, Iliomar, Lautém, 1 Juni 2003
150. Wawancara CAVR dengan Mateus de Jesus Miranda, SMP I Iliomar, Lautém 1 Juni 2003
151. Wawancara CAVR dengan Gaspar Seixas, Fuat, Iliomar, Lautém, 29 Mei 2003
152. Wawancara CAVR dengan Fernando Amaral, Fuat, Iliomar, Lautém, 28 Mei 2003
153. Wawancara CAVR dengan Gaspar Seixas, Fuat, Iliomar, Lautém, 29 Mei 2003
154. Wawancara CAVR dengan Fransisco Soares Pinto, Cainliu, Iliomar, Lautém, 1 Juni 2003
155. Kesaksian lisan Manuel Carceres da Costa dalam Audensia Publik tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, di CAVR Dili, 28-29 Juli 2003
156. Wawancara CAVR dengan Maria da Costa, Letefoho, Same, Manufahi, 24 Februari 2003
157. HRVD Pernyataan 4277
158. HRVD Pernyataan 0239
159. HRVD Pernyataan 7139
160. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 5 August 2004.
161. Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 21 September 2004.
162. Wawancara CAVR dengan Agustino Soares, Hatolia, Ermera, 30 September 2003
163. Wawancara CAVR dengan Mateus Torrezão, Fahinehan, Fatuberliu, Same, 6 September 2003; Filomeno Paixão, Dili, Juni 2004; Agostinho Boavida Ximenes (Sera Malik), Soe, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, 28 Agustus 2004; Profil Komunitas CAVR Osso-Rua, Osso-Leki-Meta [Ossu, Viqueque], 13 Februari 2003; Profil Komunitas CAVR Suco Ahik, Subdistrik Lacluta, Viqueque, 22 November 2003.
164. Wawancara CAVR dengan José Maria de Vasconcelos (Taur Matan Ruak), Dili, 9 dan 14 Juni 2004.
165. Wawancara CAVR dengan Mário Nicolau dos Reis, Dili, 19 Juni 2003.
166. John Waddingham, "Notes on 'counter-insurgency' in East Timor: The Indonesian government's resettlement program", dalam Panitia Pengawas Senat (*Senate Standing Committee*) tentang Masalah Luar Negeri dan Pertahanan (Referensi: Timor- Timor – Hak Asasi Manusia dan Kondisi Rakyatnya), Persemakmuran Australia, Canberra, 1982, hal.715-748.
167. Biro Pusat Statistik, Penduduk Propinsi Timor- Timur 1980, Dili, 1981. See Table 01.00.
168. Alex Dirdjasusanto SJ
169. Lihat John Waddingham, "Notes on 'counter-insurgency' in East Timor: The Indonesian government's resettlement program", dalam Panitia Pengawas Senat tentang Masalah Luar Negeri dan Pertahanan (Referensi: Timor -Timur – Hak Asasi Manusia dan Kondisi Rakyatnya), Persemakmuran Australia, Canberra, 1982, hal.724; Bantuan dan Timor- Timur, Dewan Australia untuk Bantuan Luar, Canberra, 1979 hal.7.
170. *Catholic Relief Services*. "Laporan Akhir: Bantuan Darurat Kemanusiaan untuk Timor -Timur (Tahap I)," 18 Maret 1980.
171. Kesaksian Gilman di Audiensi Publik tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, di CAVR Dili, 28-29 Juli 2003
172. Wawancara CAVR dengan Pe. Locatelli, Fatumaca, Baucau, 8 April 2003
173. Wawancara CAVR dengan Cosme Freitas, Vemasse, Baucau, 10 April 2003
174. HRVD 03403.
175. HRVD 03455.
176. Wawancara CAVR dengan Tome da Costa Mangalhães, Letefoho, Same, Manufahi, 24 Februari 2003

177. Profil Komunitas Alaua-Craik, Baguia, Baucau, 6 Oktober 2003
178. Lihat Profil Komunitas Ossuhuna, Baguia, Baucau, 15 September 2003; dan Profil Komunitas Defawasi, Baguia, Baucau, 23 September 2003
179. Lihat Profil Komunitas Alaua-Craik, Baguia, Baucau, 6 Oktober 2003; dan Profil Komunitas Ossuhuna, Baguia, Baucau, 15 September 2003
180. Wawancara CAVR dengan Fernando Amaral, Fuat, Iliomar, Lautem, 28 Mei 2003, Fransisco Soares Pinto, Cainliu, Iliomar, Lautem, 1 Juni 2003, Mateus de Jesus Miranda, SMP I Iliomar, Lautém, 29 Mei 2003
181. Wawancara CAVR dengan Horacio da Silva, Ossu-Kota, Viqueque, 6 April 2003
182. Wawancara CAVR dengan Horacio da Silva, Ossu-Kota, Viqueque, 6 April 2003
183. Laporan Penelitian CAVR tentang Viqueque, 12-15 Desember 2002
184. Edmundo da Cruz, Com [Moro, Lautem], 19 Juni 2003.
185. Wawancara CAVR dengan José Conceicao, Farol Dili, 19 April 2003, Eufrazia de Jesus Soares, Aula Gereja Ermera, 29 September 2003
186. Wawancara CAVR dengan Gabriel Ximenes, Fatubessi, Ermera, 28 September 2003
187. Wawancara CAVR dengan Tome Magalhães, Letefoho, Same, Manufahi, 24 Februari 2003, Saturnino Tilman, Alas, Manufahi, 25 Februari 2003 dan Maria José da Costa, Letefoho, Same, Manufahi, 24 Februari 2003
188. Wawancara CAVR dengan Saturnino Tilman, Fahinehan [Fatuberlihu, Manufahi] 5 September 2003
189. Eleajáro Teófilo, Fahinehan [Fatuberlihu, Manufahi] 5 September 2003.
190. Wawancara CAVR dengan Tomas Barbosa, Foholau, Turiscái, 9 September 2003.
191. Ibid.
192. Manuel Carceres da Costa (Laclo, Manatuto), dalam Audiensi Publik tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan di CAVR Dili, 28-29 Juli 2003
193. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 5 August 2004.
194. Profil Komunitas CAVR Ahic (Lacluta, Viqueque), 22 November 2002
195. Suatu ringkasan otoritatif tentang waktu itu dapat dilihat di Carmel Budiardo dan Liem Soei Liong, *The war against East Timor*, Zed Books, London, 1984, hal.74-95.
196. Dengar pendapat dengan subkomite Masalah Asia-Pasifik di Komite Luar Negeri, House of Representatives, 96th Congress, sesi pertama, 4 Desember 1979, h.28
197. Wawancara CAVR dengan Fernando Amaral, Fuat, Iliomar, Lautém 28 Mei 2003
198. Wawancara CAVR dengan Fernando Amaral, Fuat, Iliomar, Lautém 28 Mei 2003
199. CAVR Profil Komunitas Mau Chiga, Hato Bulico, Ainaro, 17 September 2003
200. Wawancara CAVR dengan Idelfonso dos Reis, Ermera, 13 Agustus 2003
201. Maria José da Costa, Audiensi Publik tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan di CAVR Dili, 28-29 Juli 2003
202. Alex Dirjdasusanto "Timor's continuing tragedy." Asia Bureau Australia Newsletter, No.46, June 1979.
203. David Jenkins, "A new ordeal for East Timor", Far Eastern Economic Review, 16 November 1979. p. 24.
204. Lihat submisi Pat Walsh kepada CAVR dan testimoninya sebagai saksi mata ahli pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
205. Ibid.
206. Bantuan dan Timor Timur, Canberra: ACFOA, Juli 1979, p.12
207. Wawancara CAVR dengan Padre Blassius Bessin (anak 010.doc), Kompleks SVD Kuluhun, bulan Juli 2003
208. Wawancara CAVR dengan Madre Consuela Martinez (anak 01.7c.doc) , Klinik Bebonuk Dili, 4 Juli 2003
209. Ibid.
210. Alex Dirjdasusanto "Timor's continuing tragedy." Asia Bureau Australia Newsletter, No.46, June 1979
211. Ibid.
212. Ibid.
213. Wawancara CAVR dengan Cosme Freitas, Vemasse, Baucau, 10 April 2003

214. Wawancara CAVR dengan Abilio Alberto Carlos, Aissirimou, Aileu, 27 Juni 2003; Wawancara CAVR dengan Eufrazia de Jesus Soares, Aula Gereja Ermera, 29 September 2003
215. http://www.fasthealth.com/dictionary/p/protein_shock.php
216. *Catholic Relief Services* (CRS) Submisi kepada CAVR, 27 Februari 2004, hal.8
217. Wawancara CAVR dengan Pe. José Alvaro Nolasco Santimano Meneses e Monteiro, Bedois, Becora, Dili, 29 Juni 2004
218. Bantuan dan Timor-Timur, Canberra: ACFOA, Juli 1979, hal 6
219. CRS-USCC, Laporan Akhir, Program Darurat Timor-Timur, June 1979-Desember 1980, 25 Agustus 1981, hal.1; Bishop Broderick, Sketsa Historis Timor Timur (Draft), Agustus 1982, dalam Submisi CRS, Lampiran 3, hal 8.
220. Timor -Timur Saat Ini: Catatan Perkembangan no. 1 ACFOA, Edisi kedua, Canberra: ACFOA, Juli 1980, hal.7; Bantuan dan Timor Timur, Canberra: ACFOA, Juli 1979, hal.11.
221. Uskup Broderick, Sketsa Historis Timor- Timur (Draft), Agustus 1982, dalam Submisi CRS, Lampiran 3, hal 8
222. Laporan Akhir CRS, hal.2.
223. Laporan Akhir CRS, hal. 3
224. Komunikasi ICRC dengan lembaga-lembaga Palang Merah Nasional, 21 Agustus 1979. Disebutkan dalam John Waddingham, Pat Walsh, Bill Armstrong, Komite Internasional Palang Merah Timor, makalah yang tidak diterbitkan, 4 Oktober 1979,
225. Disebutkan dalam Patrick Walsh, *The Politics of aid to East Timor*, in *East Timor – Development Dossier*, ACFOA, Canberra 1980.
226. *Rapport d'activite 1979*, Geneve: Comite International de la Croix-Rouge, hal.49-50; *Rapport d'activite 1980*, hal.44-45; *Rapport d'activite 1981*, hal.41
227. John Waddingham, "Notes on 'counter-insurgency' in East Timor: The Indonesian government's resettlement program", in Senate Standing Committee on Foreign Affairs and Defence (Reference: East Timor – Human Rights and Condition of the People), Commonwealth of Australia, Canberra, 1982, pp. 715-748.
228. Francis X. Carlin, Direktur CRS Jakarta, untuk Letnan Jenderal Benny Moerdani, Assintel Hankam, 13 Oktober 1980, Submisi CRS, Lampiran 5; Francis Carlin untuk Letnan Jenderal Moerdani, 30 Oktober 1980, submisi CRS, Lampiran 6; Patrick C. Johns untuk Uskup Broderick, 27 Mei 1981, Submisi CRS, Lampiran 20; Laporan Akhir CRS hal.29.
229. Lampiran Akhir CRS hal.4, 12, 6; Francis X. Carlin untuk Uskup Broderick, Penjelasan tentang keterlambatan dan kemunduran dalam pelaksanaan program yang mengharuskan beberapa tambahan dana, 12 September 1980, Submisi CRS, Lampiran 9; CRS Indonesia, Laporan Akhir: Bantuan Darurat untuk Timor- Timur (Tahap I), 18 Maret 1980, hal.4, Submisi CRS, Lampiran 10.
230. Lihat Waddingham et al. 1979; *Aid and East Timor* 1979.
231. Gilman dos Santos, Audiensi Publik tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan di CAVR Dili, 28-29 Juli 2003
232. *ibid*
233. *ibid*
234. Wawancara CAVR dengan Pe. Locatelli, Fatumaca, Baucau, 8 April 2003
235. Submisi CRS untuk CAVR, hal. 9
236. Audiensi di hadapan Subkomite tentang Masalah Asia Pasifik Komite Masalah Luar Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat, Kongres ke 96, sesi 1, 4 Desember 1979, hal. 20-28
237. Hubungan erat antara El Niño dan curah hujan di kepulauan Indonesia dibahas dalam Neville Nicholls, "Air-sea interaction and the possibility of long-range weather prediction in the Indonesian Archipelago". *Monthly Weather Review*, 1981, v.109, hlm.2435-2443; Malcolm Haylock dan John McBride, "Spatial coherence and predictability of Indonesian wet season rainfall". *J. Climate*, 2001, v.14, hlm. 3882-3887; dan Harry H. Hendon, "Indonesian rainfall variability: Impacts of ENSO and local air-sea interaction". *J. Climate*, 2003, v.16, hlm.1775-1790.
238. <http://www.bom.gov.au/bmrc/clfor/cfstaff/jmb/files.htm>
239. Komando Resor Militer 164 Wira Dharma, Seksi-Intel, Rencana Penyusunan Kembali Rakyat Terlatih.
240. Komando Resor Militer 164 Wira Dharma, Seksi-Intel, Petunjuk Teknis tentang Desa sebagai Titik Pusat Perhatian dan Cara Membinaanya secara Utuh (Juknis/01-A/IV/1982), 10 September 1982.

241. Petunjuk Teknis tentang Cara Mengamankan Masyarakat dari Pengaruh Propaganda GPK (Juknis/04-B/IV/1982)
242. Profil Komunitas CAVR Bualele (Quelicai, Baucau), 16 Desember 2003
243. Laporan Penelitian CAVR di Baucau, 7-11 April 2003.
244. Profil Komunitas CAVR Uaitame (Quelicai, Baucau), 12 Desember 2003
245. *ibid*
246. Laporan Penelitian CAVR di Baucau, 7-11 April 2003.
247. Profil Komunitas CAVR Lelalai (Quelicai, Baucau), 20 Oktober 2003.
248. Ernest Chamberlain, *The Struggle in Iliomar: Resistance in Rural East Timor*, Point Lonsdale, 2003, hal 21.
249. *Ibid.* hal.32.
250. "Carrascalao Cites Purwanto", *The Jakarta Post*, hal.2, 15 Juli 1992.
251. Profil Komunitas CAVR Iliomar II (Iliomar, Lautém), 29 Mei 2003.
252. Laporan Penelitian CAVR di Baucau, 7-11 April 2003.
253. Wawancara CAVR dengan Manuel Alves Moreira, (Vemasse, Baucau, 10 April 2003).
254. Manuel Carceres da Costa (Lacló, Manatuto District) dalam Audiensi Publik tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan di CAVR Dili, 28-29 Juli 2003.
255. Wawancara CAVR dengan José Andrade dos Santos, Dilor, 12 Desember 2002; dan Profil Komunitas Suco Ahic (Lacluta, Viqueque). 22 November 2002.
256. Pernyataan HRVD 00427.
257. Wawancara CAVR dengan José Andrade dos Santos, Dilor, 12 Desember 2002.
258. Pernyataan HRVD 04018.
259. CAVR Penelitian Manufahi; CAVR Wawancara dengan Saturnino Tilman, Fahinehan, Manufahi, 5 September 2003; CAVR Wawancara dengan Eleajáro Teófilo, Fahinehan, Manufahi, 5 September 2003 Fahinehan, Manufahi, 5 September 2003
260. Wawancara CAVR dengan Gabriel Ximenes di Fatubessi, Ermera, 28 September 2003
261. Pasal 13(1) UDHR dan Pasal 12(1) ICCPR.
262. Asas 6, UN Guiding Principles on Internal Displacement, E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 Februari 1998.
263. Lihat, misalnya, Asas 7(2), 18 dan 25, UN Guiding Principles on Internal Displacement, E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 Februari 1998.
264. Pasal 49 Konvensi Jenewa IV.
265. Wawancara-wawancara CAVR dengan Adelino Soares, Placido Lisboa, Ataúro (Dili) 7 Maret 2002
266. Wawancara CAVR dengan Bernadino Vilanova, Ataúro Vila, (Dili) 7 Maret 2002.
267. Proyek Penelitian CAVR di Baucau, 7-11 April 2003.
268. Kesaksian Joana Pereira, dalam Audiensi Publik tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan di CAVR Dili, 28-29 Juli 2003
269. Wawancara CAVR dengan Hermenegildo da Cruz, Viqueque, 15 Desember 2002.
270. Profil Komunitas CAVR, Mau Chiga, (Hatu-Builico, Ainaro),
271. Submisi kepada CAVR, Daftar korban dari Mau Chiga
272. Wawancara CAVR dengan Placido Lisboa, Atauro, (Dili) 7 Maret 2002
273. Wawancara CAVR dengan Adelino Soares, Placido Lisboa, Ataúro, (Dili) 7 Maret 2002; Wawancara CAVR dengan Rosalina da Costa, Dili, 27 Juli 2003
274. Wawancara CAVR dengan Faustino Gomes de Sousa, Ataúro, (Dili) 7 Maret 2002.
275. Ceu Lopes Federer, Kesaksian pada Audiensi Publik tentang Pemenuhan Politik, 17 – 18 Februari 2003.
276. Wawancara CAVR dengan Luis da Costa Soares, Letefoho, Same, Manufahi, 23 Februari 2003
277. Wawancara CAVR dengan Mario Nicolau dos Reis, Dili, 19 Juni 2003
278. Profil Komunitas CAVR Vemasse (Baucau) 28 Maret 2003
279. Profil Komunitas CAVR Eraulo, Samalete (Railaco, Ermera) 2 Desember 2002
280. Wawancara-wawancara CAVR dengan Adelino Soares, Placido Lisboa, Maria Mendes, Faustino Gomes da Sousa, Ataúro, (Dili) 7 Maret 2002.
281. Kesaksian SL, pada Audiensi Publik tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan di CAVR Dili, 28-29 Juli 2003

282. Pernyataan HRVD 05400.
283. Lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 09115 dan 02308.
284. Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 21 September 2004.
285. Pernyataan HRVD 07678
286. Pernyataan HRVD 02317
287. Pernyataan HRVD 07218
288. Pernyataan HRVD 03350
289. Wawancara CAVR dengan Abilio dos Santos, Mau Chiga, Ainaro, 4 Juni 2003
290. Pernyataan HRVD 07241
291. Wawancara CAVR dengan,UL, Nunumogue, Ainaro, 2 September 2003.
292. Wawancara CAVR dengan João de Araújo, Mau Chiga, (Hatu-Builico, Ainaro) 4 Juni 2003
293. Pernyataan HRVD 08066
294. Profil Komunitas CAVR Rotuto (Same, Manufahi) 22 April 2003.
295. Pernyataan HRVD 04117
296. Pernyataan HRVD 04434
297. Pernyataan HRVD 04711
298. Wawancara CAVR dengan Saturnino Tilman, Letefoho (Same, Manufahi) 24 Februari 2003
299. Pernyataan HRVD 04714
300. Wawancara CAVR dengan Saturnino Tilman, Letefoho (Same, Manufahi) 24 Februari 2003
301. Catatan Lapangan Riset CAVR, Manufahi, 21-26 Februari 2003
302. Kesaksian Jose Gomes pada Audiensi Publik CAVR tentang Pembantaian Massal, Dili, 28 - 29 November 2003
303. *ibid*
304. Wawancara CAVR Rita Amaral da Costa, Lalerek Mutin, Viqueque, 29 Mei 2003
305. Pernyataan HRVD 04118
306. Catatan Riset CAVR tentang Lalerek Mutin 12-15 Desember 2002; Catatan Riset CAVR tentang Lacluta 12-15 Desember 2002
307. Catatan Riset CAVR (Iliomar) 26 Mei s/d 2 Juni 2003
308. Profil Komunitas CAVR Tutuala Vila, 10 September 2002
309. Pernyataan HRVD 00745
310. Pernyataan HRVD 00719
311. Wawancara CAVR dengan VL, Mehara, (Lautém) 21 Maret 2003
312. Wawancara-wawancara CAVR dengan Gaspar Seixas, Fuat, Iliomar, Iliomar, 29 Mei 2003 dan Fernando Amaral Fuat, Iliomar (Iliomar, Lautém) 28 Mei 2003
313. Pernyataan HRVD 1593; 0150.
314. Pernyataan HRVD 3462; 1524.
315. Pernyataan HRVD 1524.
316. Pernyataan HRVD 1580; 1581.
317. Pernyataan HRVD 9022.
318. Pernyataan HRVD 1593; 1573.
319. Pernyataan HRVD 6642; 6605.
320. Pernyataan HRVD 4638.
321. Pernyataan HRVD 4668.
322. Pernyataan HRVD 4637.
323. Pernyataan HRVD 0292.
324. Wakil Jaksa Penuntut Umum Pendakwaan terhadap Eurico Guterres et al, Perkara No. 2a/2002, Dili 18 Februari 2002, paragraf 27
325. Pernyataan HRVD 4629.
326. Pernyataan HRVD 5907.
327. Pernyataan HRVD 4649.
328. Pernyataan HRVD 4687.

329. Pernyataan HRVD 5915; 05939; 04685; 04612.
330. Pernyataan HRVD 6019
331. Geoffrey Robinson, *East Timor 1999 – Crimes against Humanity*, Laporan yang dimandatkan oleh Kantor Tinggi Komisaris Hak Asasi Manusia PBB, (OHCHR), Juli 2003, diserahkan kepada CAVR pada April 2004, h.189 (Berikutnya disebut sebagai Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004)
332. Pernyataan HRVD 0410.
333. Pernyataan HRVD 0411.
334. Pernyataan HRVD 0458.
335. Pernyataan HRVD 0455.
336. Pernyataan HRVD 0481; 0414; 0413.
337. Pernyataan HRVD 3684; Wakil Jaksa Penuntut Umum Pendakwaan terhadap Cancio Lopes de Carvalho et al, Perkara No. 06/2003, Dili 9 Desember 2004
338. Pernyataan HRVD 8447.
339. Pernyataan HRVD 3615.
340. Profil Komunitas CAVR di Fatuleto, (Zumalai, Covalima) 21 Mei 2003; Belakasak, (Maucatar, Covalima) 29 Maret 2003.
341. Joint Statement Humanitarian Mission for Internally Displaced Persons, Yayasan HAK, ETADep, Caritas, Yayasan Kasimo, Posko for Emergency Aid to IDP's, Timor Aid. April 1999
342. Penuntut Umum UNTAET, Pendakwaan terhadap Leoneto Martins et al, Perkara No. 21/2001, paragraf 85-95
343. Pernyataan HRVD 0873; 0876; 5881; 0276; 2326; 5544.
344. Pernyataan HRVD 1823; 1952; 4706; 7656.
345. Pernyataan HRVD 004644; 04633; 00699; 05854; 05858; 05859.
346. Profil Komunitas CAVR di Luculai, Loidahar dan Darulete (Liquiça) 19 Februari 2003; Lihat juga Suco Aiasa CP, (Bobonaro), 17 Desember 2003
347. Wakil Jaksa Penuntut Umum Pendakwaan Lanjut terhadap Burhanuddin Siagian et al, Perkara No. 18/2003, 15 Juli 2004, paragraf 35-37
348. Laporan Unit Hak Asasi Manusia UNTAET tentang 1999, Distrik Bobonaro.
349. Pernyataan HRVD 4236; 4240; 4341; lihat juga Robinson, op cit.
350. Wakil Jaksa Penuntut Umum Pendakwaan terhadap Burhanuddin Siagian et al, Perkara No. 2/2003
351. Ibid, paragraf 110-111
352. Ibid, paragraf 113-120
353. Ibid, paragraf 127-133
354. Pernyataan HRVD 1119; 1178; 1129; 1175; 1174; 5507.
355. Pernyataan HRVD 1177; 1190
356. Pernyataan HRVD 7422; 3613; 3629; 8441; 5148; 3631; 1216; 1239; 3676; 8451; 8463; 3656; 5125; 8595; 3618; 3640; 8449
357. Pernyataan HRVD 1216.
358. Pernyataan HRVD 1239; 1739.
359. Pernyataan HRVD 8461.
360. Pernyataan HRVD 8541.
361. Pernyataan HRVD 08578; 8449; 8595.
362. Pernyataan HRVD 3613.
363. Pernyataan HRVD 5130; 5196; 5148 dan 3640.
364. Pernyataan HRVD 6349.
365. Pernyataan HRVD 3631.
366. Pernyataan HRVD 5125.
367. Pernyataan HRVD 5179.
368. Dan Satgas Pam Dili ke Danrem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dll, Telegram Rahasia No. STR/200/1999, 17 April 1999, (Koleksi Yayasan Hak, Dok. #16), dikutip dalam Robinson, p. 201
369. Ibid.
370. Pernyataan HRVD 05723; 5726; 5736; 5739.

371. Joint Statement Humanitarian Mission for Internally Displaced Persons, Yayasan HAK, ETADEP, Caritas, Yayasan Kasimo, Posko for Emergency Aid to IDP's, Timor Aid. April 1999
372. Lihat juga Pernyataan HRVD 0324; 0364; 0396; 6887.
373. Pernyataan HRVD 0378.
374. Pernyataan HRVD 0401.
375. Pernyataan HRVD 4687.
376. Pernyataan HRVD 0311.
377. Pernyataan HRVD 2609.
378. Pernyataan HRVD 2609; 2195.
379. Pernyataan HRVD 9031.
380. Pernyataan HRVD 8311; 1705; 4541; 6201; 8295; 8385; 8389; 8297; 6233.
381. Pernyataan HRVD 4541.
382. Pernyataan HRVD 8297.
383. Pernyataan HRVD 6158.
384. Laporan Posko "Report on Humanitarian Aid Convoy, Sare 2-4 July 1999"
385. Lihat Keputusan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Perkara No. 4/2001, Penuntut vs Jose Cardoso, 5 April 2003.
386. UNAMET Laporan Pendahuluan mengenai Hal-hal Kemanusiaan (Preliminary Report on Humanitarian Issues), 19 Juni 1999, Laporan lanjutan keadaan lapangan di Atambua, Suai, Fatumei, Ainaro. (Update on Situation after Field Trip to Atambua, Suai, Fatumei, Ainaro).
387. Joint Statement Humanitarian Mission for Internally Displaced Persons, Yayasan HAK, ETADEP, Caritas, Yayasan Kasimo, Posko for Emergency Aid to IDP's, Timor Aid. April 1999
388. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004
389. Martin, Ian, *Self-determination in East Timor (The United Nations, the Ballot and International Intervention)*, Lynne Rienner. USA, UK 2001, hal. 58
390. UNAMET Penilaian Kondisi Keamanan
391. UNAMET Penilaian Kondisi Keamanan
392. UNAMET Laporan Situasi Mingguan #2 (5 Juli- 11 Juli)
393. UNAMET Laporan Situasi Mingguan #4 (26 Juli – 1 Agustus)
394. UNAMET Penilaian Kondisi Keamanan
395. UNAMET Political Affairs, Penilaian Kondisi Keamanan , 26 Juli 1999.
396. UNAMET Peninjauan Kegiatan Baru Milisi, 22 Agustus, 1999.
397. UNAMET Laporan Situasi Mingguan #6 (16 Agustus-23Agustus)
398. UNAMET Laporan Situasi Mingguan #6 (16 Agustus-23Agustus)
399. Laporan Unit Hak Asasi Manusia UNTAET mengenai tahun 1999, Distrik Oecusse.
400. Laporan Unit Hak Asasi Manusia UNTAET mengenai tahun 1999, Distrik Viqueque.
401. Ibid.
402. Ian Martin, penerangan 19 August 1999, Kantor UNAMET, Dili.
403. Laporan Unit Hak Asasi Manusia UNTAET mengenai tahun 1999, Distrik Bobonaro.
404. Profil Komunitas CAVR di Ila/Dais CP (Maucatar, Covalima) 29 Maret 2003.
405. Profil Komunitas CAVR di Lela CP (Maucatar, Covalima), 18 Februari 2003
406. Profil Komunitas CAVR di Holpilat CP (Maucatar, Covalima), 13 Maret 2003
407. Martin, Ian, *Self-determination in East Timor (The United Nations, the Ballot and International Intervention)*, Lynne Rienner. USA, UK 2001, hal. 75
408. Wakil Jaksa Penuntut Umum Pendakwaan terhadap Eurico Guterres et al, Perkara No. 02/20023, Dili, 18/02/2002
409. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal 46
410. UNAMET Laporan Situasi Mingguan #6 (16 Agustus-23Agustus)
411. Ibid.
412. Laporan Unit Hak Asasi Manusia UNTAET mengenai tahun 1999, Distrik Bobonaro.
413. Dolan, C., Large, J. dan N. Obi., *Evaluation of UNHCR's Repatriation and Reintegration Programme in East Timor, 1999-2003*, Geneva: UNHCR, Evaluation and Policy Analysis Unit, February 2004.

414. Ibid.
415. Wakil Jaksa Penuntut Umum Pendakwaan terhadap Eurico Guterres et al, Perkara No. 13/2003, Dili 27 Februari 2003.
416. Ibid.
417. Manuel Abrantes, penyaksian dicatat dan dikumpulkan di Brisbane, Australia, 26 November 1999, dikutip dalam Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 221-222
418. Ibid
419. Ibid.
420. Wakil Jaksa Penuntut Umum Pendakwaan terhadap Eurico Guterres et al, Perkara No. 13/2003, Dili 27 Februari 2003
421. Ibid; Pernyataan Manuel Abrantes, dikutip di Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal 221-222
422. Pernyataan HRVD 5734: 5690.
423. Pernyataan HRVD 5664.
424. Pernyataan HRVD 5678.
425. Pernyataan HRVD 8123.
426. Wakil Jaksa Penuntut Umum Pendakwaan terhadap Eurico Guterres et al, Perkara No. 13/2003, Dili 27 Februari 2003 Pernyataan HRVD 09189; 08993.
427. Pernyataan HRVD 00110; 0131; 0159.
428. Pernyataan HRVD 0147.
429. Pernyataan HRVD 0166; Wakil Jaksa Penuntut Umum Pendakwaan terhadap Eurico Guterres et al, Perkara No. 13/2003, Dili 27 Februari 2003
430. Pernyataan HRVD 0111.
431. Pernyataan HRVD 0117.
432. Pernyataan HRVD 0116.
433. Sebagai contoh mengenai mereka yang berhasil lolos dari deportasi, lihat Pernyataan HRVD 0199; 0117; 5690; 5725 dan 5710.
434. UNTAET Laporan Unit Hak Asasi Manusia pada 1999, Distrik Bobonaro.
435. Pernyataan HRVD 3766.
436. Pernyataan HRVD 2436 Laurentina Amaral; 2444.
437. Pernyataan HRVD 2444.
438. Pernyataan HRVD 8157; 01142; 1110.
439. UNTAET Laporan Unit Hak Asasi Manusia pada 1999, Distrik Bobonaro; Wakil Jaksa Penuntut Umum Pendakwaan Lanjutan terhadap Burhanuddin Siagian et al, Perkara No. 18/2003, Dili, 15 Juli 2004.
440. Wakil Jaksa Penuntut Umum Pendakwaan Lanjutan terhadap Burhanuddin Siagian et al, Perkara No. 18/2003, Dili, 15 Juli 2004, paragraf 180.
441. Ibid, paragraf 180 – 182
442. Pernyataan HRVD 02587.
443. UNTAET Laporan Unit Hak Asasi Manusia pada 1999, Distrik Bobonaro; Pernyataan HRVD 02464;3729;2593.
444. Ibid.
445. CAVR Profil Komunitas di Saburai (Maliana, Bobonaro) 13 Januari 2003
446. Pernyataan HRVD 01874, 01195, 08239, 02594, 05220 adalah pernyataan saksi mata mengenai milisi Halililar yang membakar dan mendeportasi penduduk ke Timor Barat. Pernyataan HRVD 05597 menceritakan sebuah serangan oleh Kaer Metin Merah Putih terhadap penduduk *aldeia* Baoutal, *Suco* Deudet pada 16 September 1999. Orang-orang berhasil melarikan diri ke hutan, sementara rumah mereka dibumihanguskan.
447. Deportasi paksa oleh milisi Laksaur dan TNI di sekitar Kota Suai dikemukakan dalam Pernyataan HRVD 2023; 8485; 7385; 3672.
448. Wakil Jaksa Penuntut Umum Pendakwaan terhadap Egidio Manek et al, Perkara No. 09/2003, Dili, 28 Februari 2003, paragraph 385-387; Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal 221-222
449. Profil Komunitas CAVR di Belakasak, (Maucatar, Covalima), 29 Maret 2003, dan Fatuleto, (Zumalai, Covalima), 29 Maret 2003,

450. Pernyataan HRVD 08463, 03643 dan 03638 mengemukakan perincian mengenai pembantaian gereja Suai pada 6 September dan deportasi setelahnya; Pernyataan HRVD 05116 dan 08577 menceritakan tentang serangan terhadap gereja tersebut; Pernyataan HRVD 08459 memberikan pernyataan mengenai penyerangan dan pemerkosaan setelah serangan di gereja.
451. Fokupers, *Gender-based Violations of 1999*, (Pelanggaran berdasar gender pada 1999) Submisi kepada CAVR, Juli 2004, Pernyataan HRVD F9389.
452. Fokupers, *Gender-based Violations of 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, Pernyataan HRVD F9268.
453. Ibid, Pernyataan HRVD F9264.
454. Wakil Jaksa Penuntut Umum Pendakwaan terhadap Egidio Manek et al, Perkara No. 09/2003, Dili, 28 Februari 2003, paragraf 331
455. Ibid.
456. Pernyataan HRVD 1232; 8508; 07396.
457. Pernyataan HRVD 4650.
458. Pernyataan HRVD 0919.
459. Pernyataan HRVD 0957.
460. Pernyataan HRVD 7632.
461. Fokupers, *Gender-based Violations of 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004; dan Pernyataan HRVD F9311.
462. Pernyataan HRVD 7141.
463. UNTAET Laporan Unit Hak Asasi Manusia pada 1999, Distrik Aileu.
464. Pernyataan HRVD 2068.
465. Pernyataan HRVD 3265.
466. Pernyataan HRVD 3763.
467. Pernyataan HRVD 2071; untuk orang-orang lain yang melaporkan melarikan diri ke gunung-gunung dari kekerasan milisi lihat Pernyataan HRVD 03247 dan 03229.
468. UNTAET Laporan Unit Hak Asasi Manusia pada 1999 Distrik Ainaro; CAVR Profil Komunitas di Hora Kiik Manetu, (Ainaro) 8 Juli 2003
469. Fokupers, *Gender-based Violations of 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, HRVD F9372.
470. Pernyataan HRVD 5174.
471. Pernyataan HRVD 3680.
472. Pernyataan HRVD 7182.
473. Fokupers, *Gender-based Violations of 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, HRVD F9374; Lihat juga Pernyataan HRVD F9371 [Sebastiana da Costa] dan HRVD F9395 [Casilda da Costa] mengenai deportasi paksa dengan ditodong senapan oleh milisi Mahidi pada 23 September 1999.
474. UNTAET Laporan Unit Hak Asasi Manusia pada 1999 Distrik Ermera; Pernyataan HRVD 2198; 8083; 3510 dan 8303 menggambarkan deportasi paksa ke Timor Barat yang dilakukan oleh milisi Darah Merah Integrasi dan TNI.
475. Pernyataan HRVD 1101.
476. Pernyataan HRVD 1046.
477. Pernyataan HRVD 1774.
478. Pernyataan HRVD 1678.
479. Pernyataan HRVD 1062.
480. Pernyataan HRVD F9387.
481. Pernyataan HRVD 2466.
482. Pernyataan HRVD 2430.
483. Pernyataan HRVD 2465.
484. Pernyataan HRVD 0350.
485. Pernyataan HRVD 4079.
486. Fokupers, *Gender-based Violations of 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, HRVD F9290 dan F9291.
487. Pernyataan HRVD 4084.
488. UNTAET Laporan Unit Hak Asasi Manusia pada 1999, Distrik Viqueque.

489. UNTAET Laporan Unit Hak Asasi Manusia pada 1999, Distrik Oecusse.
490. Ibid; lihat juga Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004
491. Ibid.
492. Ibid.
493. Greenles, Don dan Robert Garran. *Deliverance: The inside story of East Timor's fight for freedom*. Allen and Unwim. New South Wales. 2002
494. Ibid.
495. CAVR Profil Komunitas, Suco Belakasak (Maucatar, Covalima), 29 Maret 2003.
496. Campbell-Nelson, Karen, Yooke Adelina Damapolii, Leonard Simanjuntak, dan Fredrika Tadu Hungu, *Perempuan di Bawah Laki-laki yang Kalah: Kekerasan terhadap Perempuan Timor Timur dalam Kamp Pengungsian di Timor Barat*, Ford Foundation, 1999, Jakarta.
497. *Jesuit Refugee Services*, laporan Kupang, 15 September 1999.
498. Campbell-Nelson et al, op cit.
499. CAVR Profil Komunitas Fatuleto (Zumalai, Covalima) 21 Mei 2003
500. Pernyataan HRVD 5188.
501. Pernyataan HRVD 5173.
502. "Indonesia: UNHCR Asks Government to Control Militias," *Refugees Daily*, 10 November 1999. Cited in Human Rights Watch, *Forced Expulsions to West Timor and the Refugee Crisis*, Desember 1999 <http://www.hrw.org/reports/1999/wtimor/>
503. "Timor: Snatch-and-run Operations", UNHCR Press Briefing Note, 19 November 1999.
504. Human Rights Watch, *Forced Expulsions and the Refugee Crisis*, Desember 1999 <http://www.hrw.org/reports/1999/wtimor/>
505. Pernyataan HRVD 0334.
506. CAVR Profil Komunitas Maliana Memo, 21 Januari 2003.
507. Fokupers, *Gender-based Violations of 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, HRVD F9320 dan F9248
508. Fokupers, *Gender-based Violations of 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, HRVD 99COV006.
509. Human Rights Watch, *Forced Expulsions and the Refugee Crisis*, December 1999 <http://www.hrw.org/reports/1999/wtimor>
510. "Indonesia: Most East Timorese Returns Blocked", *Refugees Daily*, 10 Nopember 1999 (mengutip juru bicara UNHCR Yusuf Hassan). Dikutip dalam Human Rights Watch *Forced Expulsions and the Refugee Crisis, Desember 1999* <http://www.hrw.org/reports/1999/wtimor>
511. Human Rights Watch wawancara rahasia, Stadium Olahraga, Dili, 5 November 1999.
512. Ibid.
513. Pernyataan HRVD 6284.
514. CAVR Profil Komunitas Beco II (Covalima) 2 Juni 2003
515. Communication, 21 Agustus 1979. John Waddingham, "Notes on 'counter insurgency' in East Timor: The Indonesian government Resettlement Program", dalam Komite Senat mengenai Urusan Luar Negeri dan Pertahanan [Referensi: East Timor: Human rights and condition of the people. Commonwealth of Australia, Canberra, 1982. h. 715 – 748.

Chega! merupakan sebuah kesaksian yang meresahkan. Laporan ini akan menyentak para pembaca Indonesia yang mengira bahwa di bawah rezim Soeharto semuanya berjalan damai di provinsi Indonesia ke-27 saat itu. Halaman demi halaman kita dapat membaca cerita-cerita korban pembantaian, perkosaan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan berbagai kejahatan yang tidak terbayangkan. ...[M]asyarakat di Indonesia dapat belajar dari ***Chega!*** Berkat penerbitan laporan ini oleh KPG, pembelajaran tersebut menjadi dimungkinkan. Laporan ini adalah suatu kontribusi penting ke arah demokratisasi di Indonesia dan reformasi sektor keamanannya..

Ildhal Kasim, Ketua Komnas HAM

Laporan CAVR adalah ensiklopedi sejarah kita, yang kaya baik dalam hal ajaran juga penderitaan. Kita harus memanfaatkan ajarannya yang luar biasa untuk... mencegah krisis di masa depan.

Jose Ramos-Horta,
Penerima Anugrah Nobel Perdamaian, Presiden Timor-Leste

Sosialisasi ***Chega!*** penting sekali bagi rakyat Timor-Leste maupun Indonesia agar rakyat kedua belah pihak tahu apa yang sesungguhnya terjadi.

Ade Rostina Sitompul,
pejuang Hak Asasi Manusia

Laporan CAVR menandakan sebuah titik tonggak... Harapan tulus saya adalah agar (laporan) ini menjadi kontribusi tanpa henti untuk membangun bangsa Timor dan akan mencegah berulangnya peristiwa tragis di Timor-Leste dan tempat lain.

Kofi Annan,
mantan Sekretaris Jenderal PBB

KPG (KEPUSTAKAAN POPULER GRAMEDIA)
Gedung Kompas Gramedia, Blok 1 Lt. 3
Jl. Palmerah Barat 29 - 37, Jakarta 10270
Telp. 021-5365 0110, 5365 0111 ext. 3362-3364
Fax. 021-5369 8044



Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR)



Chega!

V o l u m e III:
Pelanggaran — Bagian 2

TERBITAN CAVR LAINNYA:

Buku-buku Audiensi Publik:

Penahanan politik
Perempuan dan konflik
Pemindahan paksa dan kelaparan
Pembantaian
Konflik politik internal 1974 – 1976
Penentuan nasib sendiri dan masyarakat internasional
Anak dan konflik

Buku-buku lain:

Rona Ami-Nia Lian (Dengarkan suara kami)
Penjara Comarca Balide: Sebuah 'Gedung Sakral'
Laporan Eksekutif Chega!

Video dan radio dokumenter:

Dalan ba Dame (Jalan Menuju Perdamaian)



<http://www.cavr-timorleste.org>
info@cavr-timorleste.org

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Chega!

Laporan Komisi Kebenaran, Penerimaan,
dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

V o l u m e III:
Pelanggaran — Bagian 2

JAKARTA
KPG

Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

Volume III: Pelanggaran - Bagian 2

KPG: 950 04 10 0340

Cetakan pertama, Agustus 2010

Penyusun:

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

Foto sampul:

Poriaman Sitanggang

Pembaca akhir:

Rani Elsanti

Desain dan tata letak:

M. Roniyadi

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

**Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di
Timor-Leste - Volume III**

Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2010

xvi + 996 hlm; 150x230 mm

ISBN-13: 978-979-91-0246-1

Penerbitan buku ini didanai oleh Pemerintah Irlandia dan Jerman

Dicetak oleh PT Gramedia, Jakarta.

Isi di luar tanggungjawab percetakan.

Daftar isi

- 1515 | **Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan**
- 1529 | **Pendahuluan**
 - 1530 | Definisi dan prinsip hukum
 - 1534 | Pola-pola penahanan, penganiayaan, dan penyiksaan selama periode mandat
 - 1543 | Struktur bab dan temuan utama

 - 1546 | **Penahanan dan penyiksaan oleh UDT, 1975**
 - 1546 | Pendahuluan
 - 1547 | Pola Statistik
 - 1567 | Kerja paksa

 - 1568 | **Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh Fretilin (Agustus 1975-Februari 1976)**
 - 1568 | Pendahuluan
 - 1570 | Reaksi bersenjata Fretilin
 - 1585 | Masa pemerintahan Fretilin
 - 1595 | Setelah invasi besar-besaran Indonesia

 - 1603 | **Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh Fretilin (1976 - 1979)**
 - 1604 | Keadilan di bawah pemerintahan Fretilin
 - 1606 | Alasan penahanan
 - 1621 | *Renal* dan pusat-pusat penahanan Fretilin

 - 1637 | **Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan oleh penguasa pendudukan Indonesia, 1975-1979**
 - 1637 | Pendahuluan
 - 1637 | Profil statistik pelanggaran, 1975-79
 - 1641 | Penahanan selama invasi
 - 1642 | Agustus – November 1975
 - 1643 | Dili
 - 1658 | Pengambilalihan daerah-daerah lain
 - 1660 | Penahanan di luar Dili
 - 1664 | Pengamanan wilayah: 1976-1979
 - 1677 | Penahanan setelah penyerahan diri atau penangkapan
 - 1690 | Kesimpulan

- 1691** | Penahanan oleh penguasa pendudukan Indonesia, 1980 – 1984
- 1691** | Pendahuluan
 - 1691** | Profil pelanggaran
 - 1695** | Pemberontakan (*Levantamento*) Marabia, 10 Juni 1980
 - 1705** | Operasi Keamanan 1981
 - 1710** | Akhir 1982 – Levantamento Falintil di sekitar Gunung Kablaki
 - 1717** | Penahanan selama gencatan senjata: Maret – Agustus 1983
 - 1718** | Kegagalan gencatan senjata dan Operasi Persatuan, Agustus 1983
 - 1728** | Operasi Keamanan di distrik-distrik lain di Timor-Leste
 - 1737** | Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan pada 1984
- 1740** | Penahanan dan penyiksaan oleh penguasa pendudukan Indonesia 1985-1998
- 1740** | Pendahuluan
 - 1741** | Profil pelanggaran
 - 1743** | Penahanan para anggota klandestin
 - 1754** | Demonstrasi
 - 1776** | SARA dan kerusuhan
 - 1780** | Perburuan terhadap para pemimpin Falintil pada 1990-an
 - 1787** | Pembalasan atas serangan-serangan Resistansi
- 1802** | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh penguasa pendudukan Indonesia pada 1999
- 1803** | Profil statistik penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan pada 1999
 - 1809** | Lokasi penahanan
 - 1810** | Alasan penahanan dan penyiksaan
 - 1813** | Penahanan dan penyiksaan, November 1998 – Maret 1999
 - 1817** | Penahanan dan penyiksaan selama April 1999
 - 1827** | Mei 1999
 - 1835** | Penahanan dan penyiksaan antara Juni – 30 Agustus, hari berlangsungnya Jajak Pendapat
 - 1837** | Penahanan dan penyiksaan setelah Jajak Pendapat
 - 1842** | Pembebasan
 - 1844** | Penyiksaan dan perlakuan buruk pada 1999
 - 1847** | Kesimpulan
- 1848** | Temuan
- 1848** | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan UDT
 - 1850** | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan Fretilin
 - 1857** | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh militer, polisi, dan para “agen” Indonesia
 - 1868** | Pembebasan

..... 1899 | Bab 7.5: Pelanggaran Hukum Perang

1903 | Pendahuluan

1908 | Standar yang relevan

1909 | Pelanggaran Hukum Perang oleh Pasukan Militer Indonesia

1909 | Serangan terhadap warga sipil dan harta-benda sipil

1919 | Pelanggaran ekonomi dan harta benda—kerusakan sampingan atau strategi terencana?

1932 | Penganiayaan terhadap petempur musuh

1936 | Sarana perang di luar hukum

1941 | Perekrutan paksa ke dalam kegiatan militer

1949 | Dipaksa mencari keluarga di hutan

1956 | Pelanggaran Hukum Perang oleh Fretilin/Falintil

1963 | Temuan

..... 1975 | Bab 7.6: Pengadilan politik

1981 | Pendahuluan

1983 | Kerangka hukum

1984 | Hukum Indonesia

1984 | Hukum kemanusiaan internasional

1985 | Standar-standar hak asasi manusia internasional

1986 | Kerangka analitis

1986 | Gelombang pertama pengadilan politik: 1983-85

1986 | Latar belakang

1989 | Proses hukum formal

1990 | Memberi tahu tersangka akan hak-hak dasar mereka

1992 | Penyiksaan dan penganiayaan dalam tahanan

1994 | Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

1996 | Sidang Pengadilan

2008 | Hak naik banding

2009 | Kesimpulan

2011 | Pengadilan Santa Cruz: 1992

2012 | Ulasan Fakta

2014 | Penangkapan

2015 | Prasadang

2023 | Persidangan

2034 | Putusan

2036 | Banding

- 2037 | Pemenjaraan
- 2037 | Pengadilan dan penghukuman anggota pasukan keamanan Indonesia yang terlibat dalam Pembantaian Santa Cruz.
- 2037 | Kesimpulan

2042 | Pengadilan Jakarta 1992

- 2043 | Penangkapan
- 2046 | Penahanan pra-sidang
- 2049 | Akses kepada bantuan hukum
- 2050 | Investigasi
- 2051 | Persidangan
- 2056 | Banding
- 2058 | Kesimpulan

2059 | Pengadilan Xanana Gusmão

- 2060 | Prasadang
- 2068 | Persidangan
- 2080 | Pengajuan grasi
- 2082 | Peninjauan Kembali
- 2082 | Vonis
- 2083 | Kesimpulan

2084 | Pengadilan Mahkota, 1997

- 2085 | Penangkapan
- 2087 | Prasadang
- 2089 | Akses untuk pengacara
- 2090 | Investigasi
- 2092 | Sidang pengadilan
- 2099 | Banding
- 2100 | Kesimpulan

2101 | Temuan

2115 | Bab 7.7: Pemerksaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual

2121 | Pengantar

- 2125 | Definisi dan metodologi
- 2127 | Budaya bisu

2128 | Pemerksaan

- 2130 | Pemerksaan dalam konteks konflik antar partai (1975)
- 2132 | Pemerksaan selama masa pendudukan Indonesia (1975-1999)

- 2184 | Perbudakan seksual
 - 2186 | Perspektif korban
 - 2187 | Perbudakan seksual dalam konteks konflik antarpantai
 - 2188 | Perbudakan seksual selama masa pendudukan Indonesia (1975-1999)

- 2229 | Bentuk-bentuk lain kekerasan seksual
 - 2230 | Bentuk-bentuk lain kekerasan seksual dalam konteks konflik antarpantai
 - 2230 | Bentuk-bentuk lain kekerasan seksual selama pendudukan Indonesia (1975-1999)

- 2249 | Dampak kekerasan seksual terhadap korban
 - 2250 | Kesehatan reproduksi
 - 2253 | Kesehatan mental
 - 2254 | Lingkaran pengorbanan

- 2263 | Temuan
 - 2263 | Kekerasan seksual oleh anggota Fretilin dan UDT
 - 2263 | Kekerasan seksual oleh anggota Falintil
 - 2263 | Pemerkosaan dan penyiksaan seksual oleh anggota pasukan keamanan Indonesia
 - 2267 | Impunitas bagi pelaku pemerkosaan dan penyiksaan seksual
 - 2268 | Perbudakan seksual
 - 2269 | Impunitas bagi pelaku perbudakan seksual
 - 2270 | Pelanggaran seksual sebagai alat teror dan degradasi
 - 2270 | Jumlah seluruh korban kekerasan seksual
 - 2271 | Dampak terhadap korban

2279 | Bab 7.8: Pelanggaran hak anak

- 2285 | Pendahuluan
 - 2289 | Metode penelitian

- 2290 | Anak-anak dalam konflik politik bersenjata dan gerakan klandestin
 - 2292 | Anak-anak sebagai TBO dan keikutsertaan dalam operasi
 - 2311 | Anak-anak yang direkrut milisi pro-otonomi
 - 2318 | Anak-anak dalam jaringan klandestin
 - 2329 | Anak-anak dalam Falintil

2338 | Penahanan sewenang-wenang, pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak

2338 | Penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang

2357 | Pembunuhan dan penghilangan

2372 | Kekerasan seksual

2385 | Pemandahan anak-anak ke Indonesia

2387 | Jumlah anak-anak yang dipindahkan ke Indonesia

2389 | Pola selama periode mandat

2409 | Kondisi anak-anak yang tinggal di Indonesia

2413 | Kesimpulan dan temuan

2437 | **Bab 7.9: Pelanggaran hak ekonomi dan sosial**

2444 | Pendahuluan

2445 | Kerja Komisi mengenai hak sosial dan ekonomi

2446 | Hubungan hak sosial dan ekonomi dengan hak-hak lainnya

2448 | Hak atas standar hidup yang memadai

2448 | Pembangunan dan pengeluaran pemerintah

2453 | Sektor kopi

2460 | Hak rakyat untuk menggunakan sumberdaya alam

2463 | Hak untuk mendapatkan makanan

2470 | Rumah dan tanah

2475 | Hak atas kesehatan

2475 | Pengertian 'hak atas kesehatan'

2477 | Kesehatan masyarakat di masa kekuasaan Portugis

2478 | Pendudukan Indonesia

2483 | Pengendalian kelahiran secara paksa

2490 | Kesehatan jiwa dan trauma

2494 | Hak atas pendidikan

2501 | Temuan

2501 | Temuan umum

2502 | Temuan spesifik

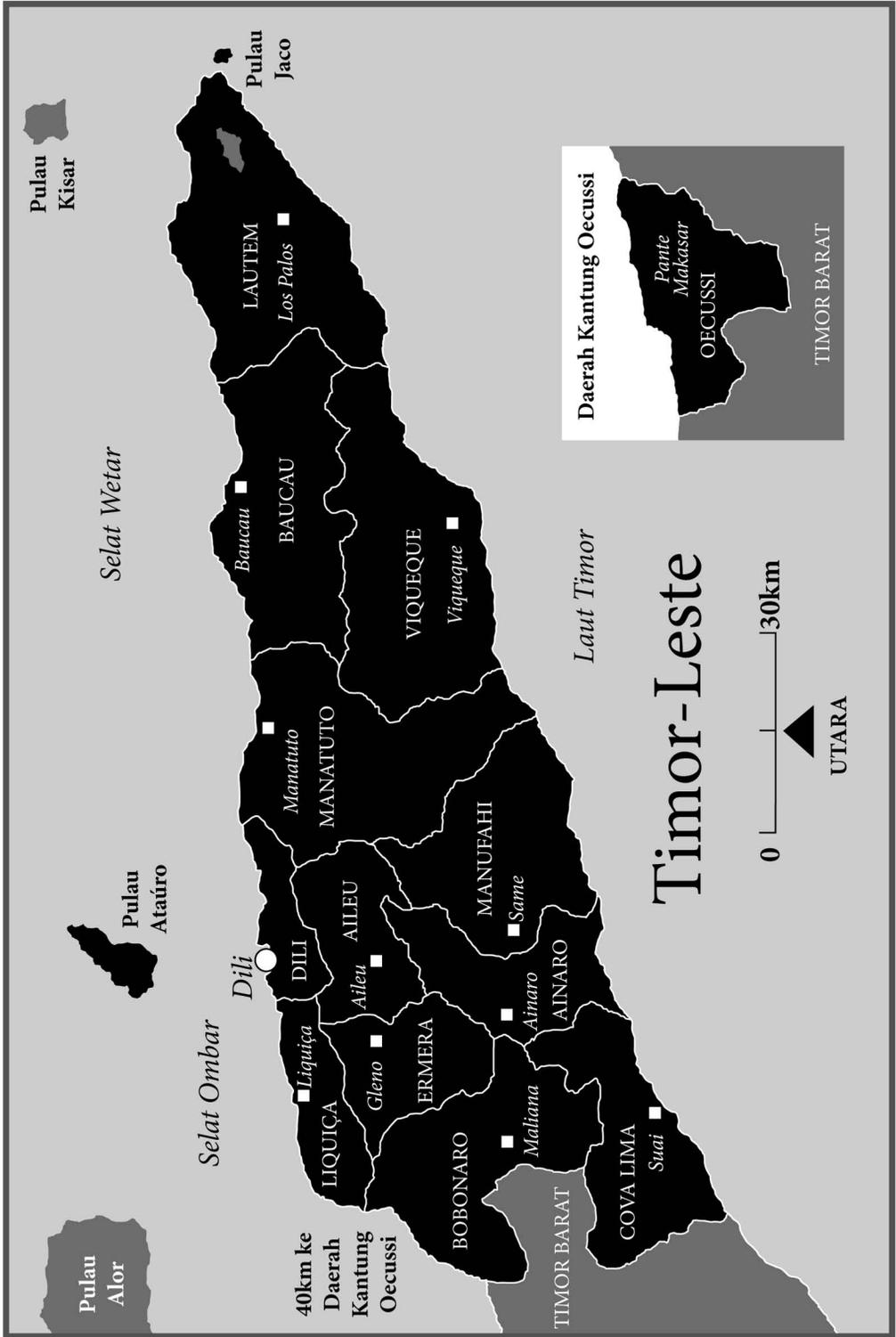
Daftar tabel:

- 1542** Pelanggaran oleh kelompok pelaku kelembagaan
- 1551** Pusat-pusat penahanan utama di setiap distrik
- 1555** Penangkapan dan penahanan pendukung Fretilin di Dili
- 1569** Jumlah penyiksaan yang dilaporkan, yang dikaitkan dengan Fretilin, menurut bulan kejadian, 1975
- 1569** Jumlah penyiksaan yang dilaporkan, yang dikaitkan dengan Fretilin, menurut wilayah geografis, 1975
- 1682** Berbagai pengalaman penyerahan diri dan penangkapan massal komunitas, 1978-1979
- 1741** Rata-rata kekerasan harian untuk penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan selama fase 1974-1999
- 1743** Rasio penyiksaan per penahanan yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia yang dilaporkan selama periode 1974-1999
- 1745** Contoh-contoh penahanan sewenang-wenang periode 1985-1998
- 1770** Tahanan yang ditangkap sehubungan dengan demonstrasi Santa Cruz dan perlakuan terhadap mereka
- 1778** Penahanan dan penganiayaan Marcelino Duarte Barros
- 1778** Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan di Mauliana (Bobonaro)
- 1794** Pembunuhan dan penghilangan di Quelicai 1978 - 1979
- 1804** Jumlah kasus penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan pada 1999 yang dicatat oleh Komisi
- 1940** Kemampuan taktis pesawat
- 1940** Jenis amunisi dan jangkauannya
- 2196** Ringkasan kasus perbudakan seksual dalam rumahtangga (1975-1984)
- 2208** Tahanan Perempuan di Gedung Sekolah Dasar, Dare, Atauro, 1982-1983
- 2448** Alokasi Dana Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) untuk Provinsi Timor Timur dan Beberapa Provinsi Terpilih, 1969/1970-1993/1994 (dalam Rp miliar)
- 2449** Anggaran dan dana Instruksi Presiden (Inpres) yang dialokasikan untuk Provinsi Timor Timur, 1976/1977-1992/1993
- 2450** Pangsa sektoral PDB dan tingkat pertumbuhan 1984-1997 (%)
- 2451** Struktur investasi negara per sektor 1984/1985-1993/1994 (%)
- 2452** Indikator Ekonomi Pembandingan: Timor-Leste dan Indonesia
- 2453** Timor-Leste: Indikator Pendapatan dan Kemiskinan 1990-1999
- 2457** Harga kopi dan produksi 1975-1993
- 2478** Indikator Pembangunan Terpilih 1996
- 2496** Murid dan Guru di Timor-Leste 1998/1999
- 2497** Kemiskinan dan Tingkat Pendidikan di Timor-Leste

Daftar grafik:

- 1535** | Bagan jumlah tindakan pelanggaran nonfatal yang dilaporkan, 1974 – 1999
- 1536** | Bagan jumlah pelanggaran yang dilaporkan, berdasarkan jenis pelanggaran dan distrik
- 1537** | Bagan jumlah tindakan penahanan yang dilaporkan, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 – 1999
- 1537** | Bagan jumlah penyiksaan yang dilaporkan, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 – 1999
- 1539** | Bagan pelanggaran lintas-waktu, 1974 – 1999
- 1539** | Bagan pelanggaran lintas-waktu, 1974 – 1999
- 1540** | Bagan jumlah pelanggaran nonfatal lintas-waktu, 1974 – 1999, yang dilakukan oleh polisi
- 1541** | Bagan pelanggaran lintas-waktu, 1974 – 1999
- 1547** | Bagan jumlah penahanan yang dilaporkan, yang dilakukan oleh UDT, berdasarkan distrik, 1974 – 1979
- 1604** | Bagan jumlah tindakan penahanan yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil terhadap anggota Fretilin/Falintil, berdasarkan distrik, 1974 – 1979
- 1638** | Jumlah tindakan penyiksaan yang dilaporkan, 1974 – 1979
- 1638** | Bagan jumlah penahanan yang dilaporkan, 1974 – 1979
- 1639** | Bagan jumlah penganiayaan yang dilaporkan, 1980 – 1989
- 1640** | Bagan jumlah penahanan, menurut pelaku, 1974 – 1979
- 1641** | Bagan jumlah penyiksaan, menurut pelaku, 1974-1979
- 1692** | Bagan tindakan penahanan yang dilaporkan, 1980 – 1989
- 1692** | Bagan tindakan penyiksaan yang dilaporkan, 1980 – 1989
- 1693** | Bagan jumlah penganiayaan yang dilaporkan, 1980 – 1989
- 1694** | Bagan pelanggaran lintas-waktu, 1974 – 1999
- 1694** | Bagan pelanggaran secara lintas-waktu, 1974 – 1999
- 1695** | Bagan pelanggaran lintas-waktu, 1974 – 1999
- 1702** | Bagan jumlah orang yang ditahan di Ataúro, Juni 1980 – Oktober 1984
- 1703** | Bagan jumlah penahanan yang dilaporkan, di dalam dan di luar Ataúro, 1974 – 1999
- 1742** | Bagan pelanggaran lintas-waktu, 1974 – 1999
- 1804** | Bagan tindakan penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pembantu Timornya, 1999
- 1808** | Bagan penyiksaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pendukung orang Timor, 1999
- 1808** | Bagan penganiayaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan kakitangan orang Timor, 1999
- 1809** | Bagan penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan kakitangan orang Timor, 1974 - 1999
- 1943** | Jumlah tindak perekrutan paksa yang dilaporkan, 1974- 1999
- 2122** | Jumlah pelanggaran berbasis seksual yang dilaporkan, 1974-1999
- 2123** | Jumlah pelanggaran seksual yang dilaporkan, berdasarkan distrik
- 2129** | Jumlah pemerkosaan yang dilaporkan, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999

- 2130** | Pelanggaran dalam lintas waktu, 1974-1999
- 2133** | Jumlah pemerkosaan berdasarkan pelaku, 1974-1999
- 2164** | Jumlah pemerkosaan berdasarkan pelaku, 1999
- 2170** | Jumlah pemerkosaan berdasarkan pelaku, 1999
- 2185** | Pelanggaran dalam lintas waktu, 1974-1999
- 2186** | Jumlah perbudakan seksual berdasarkan pelaku, 1974-1999
- 2340** | Persentase penahanan anak-anak
- 2341** | Persentase penahanan anak-anak
- 2341** | Pelanggaran (penyiksaan) dalam lintas-waktu, 1974-1999
- 2342** | Jumlah tindak penahanan yang dilaporkan, berdasarkan umur dan jenis kelamin, 1974-1999
- 2358** | Tingkat pembunuhan penduduk sipil (per 10.000 orang), berdasarkan umur dan jenis kelamin, 1974-1999
- 2359** | Pelanggaran (pembunuhan) dalam lintas-waktu, 1974-1999
- 2360** | Jumlah tindak penghilangan, berdasarkan umur dan jenis kelamin, 1974-1999
- 2456** | Harga pasar kopi (1974-2000)
- 2493** | Jumlah tindak rekrutmen paksa yang dilaporkan kepada Komisi, 1974-1999
- 2493** | Jumlah perekrutan paksa menurut pelaku, 1974-1999



Chega!

Bagian 7.

Pelanggaran — Bagian 2



Foto dari arsip CAVR

Chega!

Bagian 7
Bab 7.4.

Penahanan sewenang-wenang,
penyiksaan, dan penganiayaan

Bab 7.4. Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan

1529 | Pendahuluan

1530 | Definisi dan prinsip hukum

1530 | Penahanan sewenang-wenang

1530 | Penangkapan

1530 | Penahanan dan pemenjaraan

1531 | Penyiksaan

1532 | Perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (penganiayaan)

1533 | Perbedaan antara penganiayaan dan penyiksaan

1533 | Berbagai larangan sesuai dengan hukum setempat pada penyerangan dan penganiayaan

1534 | Pola-pola penahanan, penganiayaan, dan penyiksaan selama periode mandat

1534 | Pola lintas waktu

1535 | Pola lintas-ruang

1536 | Korban

1537 | **Gender**

1538 | **Afiliasi**

1538 | **Besaran kelompok**

1540 | Pelaku kelembagaan

1542 | Tempat orang ditahan

1543 | Struktur bab dan temuan utama

1543 | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh UDT, 1975

1544 | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh Fretilin, 1975

1544 | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh Fretilin/Falintil, 1977 -1979

1545 | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh militer Indonesia dan kolaboratornya, 1975 - 1979

1545 | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh militer Indonesia dan pasukan pembantunya asal Timor-Leste, 1980-84

1545 | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh militer Indonesia dan pasukan pembantunya asal Timor-Leste, 1985-98

1546 | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh militer Indonesia dan pasukan pembantunya asal Timor-Leste, 1999

..... 1546 | Penahanan dan penyiksaan oleh UDT, 1975

1546 | Pendahuluan

1547 | Pola statistik

1548 | Korban

1549 | Penangkapan sewenang-wenang

1551 | Pusat penahanan dan kasus pelanggaran HAM

1551 | **Pusat penahanan**

1552 | Dili

1554 | **Boks: Manuel Agostinho Freitas, tahanan di Palapaço**

1556 | Ermera

1558 | **Boks: Manuel Duarte, dipenjarakan di Aifu**

1561 | Bobonaro

1564 | Manufahi

1565 | Baucau

1565 | Liquiçá

1566 | Lautém

1567 | Kerja paksa

..... 1568 | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh Fretilin
(Agustus 1975-Februari 1976)

1568 | Pendahuluan

1570 | Reaksi bersenjata Fretilin

1570 | Pemberontakan umum bersenjata

1571 | Alasan penahanan sewenang-wenang

1572 | Tempat penahanan

1572 | **Dili**

1574 | **Comarca Balide**

1575 | **Aileu**

1576 | **Manufahi**

1578 | **Ermera**

1580 | **Ainaro**

1580 | **Baucau**

1582 | **Lautém**

1582 | **Liquiçá**

1583 | **Viqueque**

1584 | **Manatuto**

1584 | **Bobonaro**

- 1585 | Masa pemerintahan Fretilin
 - 1586 | Penahanan lanjutan terhadap pendukung UDT
 - 1587 | Penahanan pendukung dan anggota Apodeti
 - 1588 | Perpindahan tahanan antara pusat-pusat penahanan
 - 1590 | Boks: Kehidupan di Aissirimou
 - 1593 | Pengadilan dari para tahanan Fretilin
- 1595 | Setelah invasi besar-besaran Indonesia
 - 1597 | Boks: Pelarian dari Comarca Balide, 7 Desember 1975: Anselmo dos Santos dan Frederico Almeida Santos
 - 1598 | Pemindahan Tahanan dari Dili ke Aileu dan kemudian ke Same
 - 1601 | Hola Rua (Same, Manufahi)

..... 1603 | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh Fretilin (1976 - 1979)

- 1604 | Keadilan di bawah pemerintahan Fretilin
- 1606 | Alasan penahanan
 - 1606 | Pengkhianatan karena berencana untuk menyerahkan diri atau menghubungi orang-orang yang berada di kawasan yang dikuasai ABRI
 - 1609 | Boks: Penahanan Padre Luis da Costa
 - 1612 | Konflik bersenjata internal
 - 1612 | Konflik antara Helio Pina dan José da Silva, Oktober 1976
 - 1613 | Perselisihan di Iliomar, Lautém, November 1976
 - 1614 | Boks: Konflik internal Fretilin di Iliomar, November 1976
 - 1616 | Perselisihan antara Francisco Xavier do Amaral dan CCF, September 1977
 - 1617 | Boks: Penahanan dan penyiksaan Francisco Xavier do Amaral
 - 1619 | Menegakkan disiplin
- 1621 | *Renal* dan pusat-pusat penahanan Fretilin
 - 1623 | Ermera
 - 1623 | Viqueque
 - 1625 | Lautém
 - 1627 | Aileu
 - 1627 | Boks: Rehabilitasi Nasional (*Renal*) Nundamar di Remexio, Aileu
 - 1632 | Boks: Penahanan Ambulan
 - 1633 | Manufahi

1633 | Boks: Penahanan Tomé da Costa Magalhães

1635 | Liquiçá

1636 | Boks: Kekerasan di daerah-daerah Fretilin

1637 | Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan oleh penguasa pendudukan Indonesia, 1975-1979

1637 | Pendahuluan

1637 | Profil statistik pelanggaran, 1975-79

1639 | Para pelaku

1641 | Penahanan selama invasi

1642 | Agustus – November 1975

1643 | Dili

1643 | Invasi

1644 | Hari-hari setelah invasi

1647 | Boks: Pusat-pusat penahanan di Dili

1651 | Pola awal penahanan

1653 | Para korban yang dijadikan sasaran penahanan

1654 | Boks: Kesetiaan kepada Indonesia

1655 | Interogasi, penyiksaan, dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi lainnya

1656 | Boks: Interogasi di Dili

1658 | Pengambilalihan daerah-daerah lain

1660 | Perpecahan komunitas

1660 | Penahanan di luar Dili

1661 | Boks: Studi kasus: pusat-pusat penahanan di Kota Baucau

1664 | Pengamanan wilayah: 1976-1979

1665 | Perkembangan jaringan Intelijen

1666 | Penahanan para pejuang Resistansi

1667 | Penahanan karena ikut serta dalam serangan Falintil

1668 | Boks: Dilepas tetapi tidak bebas

1670 | Penahanan anggota klandestin

1670 | Boks: Terbongkarnya jaringan klandestin

1673 | Boks: Interogasi seorang anggota klandestin

1675 | Penahanan karena anggota keluarga ada di hutan

1677 | Penahanan setelah penyerahan diri atau penangkapan

1677 | Penyerahan awal

1679 | Boks: Cerita penerjemah Timor-Leste selama interogasi

1680 | Penyerahan diri secara massal: 1978-1979

1684 | Boks: Penahanan di Kamp Uma Metan, Alas, Manufahi

1686 | Penangkapan komunitas 1978-79

1687 | Penahanan setelah pulang

1688 | Boks: Menjebak mantan pemimpin Fretilin

1690 | Kesimpulan

1691 | Penahanan oleh penguasa pendudukan Indonesia, 1980 – 1984

1691 | Pendahuluan

1691 | Profil pelanggaran

1695 | Pemberontakan (*Levantamento*) Marabia, 10 Juni 1980

1696 | Penahanan sewenang-wenang

1696 | Penyiksaan dan penganiayaan

1698 | Boks: Penahanan dan penyiksaan Bernardino Ximenes Villanova

1700 | Pemindahan tahanan politik ke Pulau Ataúro

1701 | Boks: Ataúro

1705 | Operasi Keamanan 1981

1709 | Setelah Operasi Keamanan

1710 | Akhir 1982 – *Levantamento* Falintil di sekitar Gunung Kablaki

1710 | Penangkapan awal

1711 | Setelah *Levantamento*

1711 | **Penangkapan**

1712 | **Penahanan dan interogasi**

1713 | **Siksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat**

1714 | **Tahanan desa**

1716 | **Pemindahan paksa setelah penyerangan**

1717 | Penahanan selama gencatan senjata: Maret – Agustus 1983

1718 | Kegagalan gencatan senjata dan Operasi Persatuan, Agustus 1983

1719 | Kraras

1722 | Uato Carbau

1722 | Iliomar

1723 | Mehara

1724 | Boks: Kisah Maria

1725 | Penyiksaan dan penganiayaan

1726 | Setelah kejadian Levantamento

1726 | **Pemindahan tahanan keluar wilayah**

1726 | **Penahanan desa di Lalerek Mutin, Viqueque**

1727 | **Penahanan besar-besaran di Lautém**

1728 | Operasi Keamanan di distrik-distrik lain di Timor-Leste

1730 | Aileu 1983

1731 | Boks: Penjara di Indonesia, 1983 sampai akhir dekade 1990-an

1734 | Penangkapan anggota pergerakan klandestin perkotaan

1736 | Boks: Penangkapan dan interogasi di Dili akhir 1983

1737 | Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan pada 1984

1740 | Penahanan dan penyiksaan oleh penguasa pendudukan Indonesia 1985-1998

1740 | Pendahuluan

1741 | Profil pelanggaran

1742 | Pelanggaran lintas ruang

1742 | Penahanan dan penyiksaan

1743 | Afiliasi pelaku

1743 | Penahanan para anggota klandestin

1744 | 1985-1998

1746 | Boks: Penjara-penjara di Timor-Leste

1749 | 1989 – 1998

1750 | Boks: Penahanan seorang pemimpin klandestin

1752 | Boks: Penangkapan klandestin di Dili

1754 | Penangkapan anggota klandestin di Indonesia

1754 | Demonstrasi

1755 | Penangkapan mengantisipasi sebuah demonstrasi

1755 | **Kunjungan Sri Paus Yohanes Paulus II**

1756 | **Delegasi Parlemen Portugal**

1759 | Penangkapan pada saat atau setelah kejadian

1759 | **Misa di Tacitolu oleh Sri Paus Yohanes Paulus II**

1760 | **Kunjungan Dutabesar AS, John Monjo**

1760 | **SMPN IV, Dili**

1761 | **Demonstrasi Santa Cruz**

1762 | Boks: Tahanan pembinaan

1764 | **Kunjungan delegasi Portugis yang dibatalkan**

1764 | Boks: Bangkitnya milisi, 1985-1998

1769 | Interogasi dan penyiksaan korban yang berhubungan dengan demonstrasi

1772 | Boks: Interogasi setelah demonstrasi Santa Cruz

1774 | **Demonstrasi di Jakarta, 19 November 1991 dan penangkapan-penangkapan di Bali**

1776 | **Demonstrasi-demonstrasi Untim**

1776 | SARA dan kerusuhan

1779 | Insiden setelah penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian

1780 | Boks: Kawanannya ninja dan kawanannya antininja

1780 | Perburuan terhadap para pemimpin Falintil pada 1990-an

1783 | Boks: Penangkapan Xanana Gusmão

1785 | Boks: Kisah Olga Corte-Real

1787 | Pembalasan atas serangan-serangan Resistansi

1787 | Baucau, Oktober 1992

1788 | Ermera, Oktober 1996

1789 | Serangan-serangan seputar pemilihan umum Indonesia 1997

1790 | Penangkapan-penangkapan setelah serangan di Dili

1791 | Penangkapan-penangkapan setelah penyerangan di Quelicai (Baucau)

1795 | Boks: Polisi

1797 | Liquiçá, Juli 1997

1798 | Dua insiden Falintil di Alas (Manufahi), akhir 1998

1798 | **Serangan pertama**

1800 | **Serangan kedua**

1802 | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh penguasa penduduk Indonesia pada 1999

1803 | Profil statistik penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan pada 1999

1803 | Pola-pola lintas waktu untuk penahanan dan penyiksaan

1804 | Pola-pola lintas ruang

1805 | Lama penahanan

1805 | Kelompok-kelompok sasaran pada 1999

1806 | **Anggota CNRT**

1806 | **Anggota klandestin**

1806 | **Aktivistis pelajar dan mahasiswa**

1807 | **Staf UNAMET**

1807 | Pelaku-pelaku

1809 | Lokasi penahanan

1810 | Alasan penahanan dan penyiksaan

1810 | Perekrutan milisi secara paksa

1811 | Penerapan kuasa kekuatan pro-otonomi atas masyarakat

1811 | Pembalasan terhadap serangan kelompok Resistansi

1812 | Hukuman terhadap orang-orang yang terang-terangan mendukung kemerdekaan

1812 | Memperoleh informasi intelijen tentang para pemimpin dan struktur prokemerdekaan

1812 | Pemindahan penduduk sipil dan penangkapan orang-orang yang lari

1813 | Penahanan dan penyiksaan, November 1998 – Maret 1999

1813 | Sebelum pengumuman Jajak Pendapat

1815 | Setelah pengumuman Opsi Kedua

1816 | **Dilor, Viqueque, 20 Maret**

1817 | **Maliana, Bobonaro, Maret 1999**

1817 | **Zumalai, Covalima, Maret 1999**

1817 | Penahanan dan penyiksaan selama April 1999

1818 | Liquiçá, April 1999

1819 | Ermera, April 1999

1821 | Covalima, April 1999

1822 | Cailaco, Bobonaro, April 1999

1823 | Oecussi, April 1999

1824 | Dili, 17 April 1999

1826 | Viqueque, April 1999

1827 | Molop, Bobonaro, 24 April 1999

1827 | Mei 1999

1828 | Serangan Falintil di Lolotoe, Bobonaro, Mei 1999

1830 | Ermera, Mei 1999

1831 | Perburuan lanjutan terhadap anggota klandestin

1833 | **Boks: Tanda-tanda pengenalan**

1834 | Manatuto, keterlibatan bupati

1835 | Penahanan dan penyiksaan antara Juni – 30 Agustus, hari berlangsungnya Jajak Pendapat

- 1837 | Penahanan dan penyiksaan setelah Jajak Pendapat
 - 1838 | Setelah Jajak Pendapat
 - 1839 | Penghukuman dan balas dendam
 - 1840 | Kasus-kasus penahanan sebelum evakuasi
 - 1841 | Penahanan terhadap orang-orang yang akan dieksekusi
- 1842 | Pembebasan
 - 1842 | Syarat lapor diri
 - 1842 | Suap
 - 1843 | Campurtangan pihak lain
 - 1844 | Melarikan diri
- 1844 | Penyiksaan dan perlakuan buruk pada 1999
 - 1845 | Penghinaan dan perendahan martabat
 - 1845 | Kekerasan publik
 - 1846 | Pelecehan secara verbal
 - 1846 | Perlakuan kejam dan merendahkan martabat lainnya
- 1847 | Kesimpulan

..... 1848 | Temuan

- 1848 | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan UDT
 - 1848 | Penahanan
 - 1849 | Penganiayaan dan penyiksaan
- 1850 | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan Fretilin
 - 1850 | Selama konflik bersenjata internal
 - 1850 | **Penahanan**
 - 1852 | **Penyiksaan dan penganiayaan**
 - 1854 | 1976-1979
 - 1854 | **Penahanan**
 - 1855 | **Penyiksaan dan penganiayaan**
- 1857 | Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh militer, polisi, dan para "agen" Indonesia
 - 1857 | Penangkapan dan penahanan
 - 1860 | Kondisi-kondisi penahanan
 - 1863 | Interogasi
 - 1864 | Penyiksaan dan penganiayaan
- 1868 | Pembebasan

Daftar tabel:

- 1542** | **Tabel 1** : Pelanggaran oleh kelompok pelaku kelembagaan
- 1551** | **Tabel 2** : Pusat-pusat penahanan utama di setiap distrik
- 1555** | **Tabel 3** : Penangkapan dan penahanan pendukung Fretilin di Dili
- 1569** | **Tabel 4** : Jumlah penyiksaan yang dilaporkan, yang dikaitkan dengan Fretilin, menurut bulan kejadian, 1975
- 1569** | **Tabel 5** : Jumlah penyiksaan yang dilaporkan, yang dikaitkan dengan Fretilin, menurut wilayah geografis, 1975
- 1682** | **Tabel 6** : Berbagai pengalaman penyerahan diri dan penangkapan massal komunitas, 1978-1979
- 1741** | **Tabel 7** : Rata-rata kekerasan harian untuk penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan selama fase 1974-1999
- 1743** | **Tabel 8** : Rasio penyiksaan per penahanan yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia yang dilaporkan selama periode 1974-1999
- 1745** | **Tabel 9** : Contoh-contoh penahanan sewenang-wenang periode 1985-1998
- 1770** | **Tabel 10**: Tahanan yang ditangkap sehubungan dengan demonstrasi Santa Cruz dan perlakuan terhadap mereka
- 1778** | **Tabel 11**: Penahanan dan penganiayaan Marcelino Duarte Barros
- 1778** | **Tabel 12**: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan di Mauliana (Bobonaro)
- 1794** | **Tabel 13**: Pembunuhan dan penghilangan di Quelicai 1978 - 1979
- 1804** | **Tabel 14**: Jumlah kasus penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan pada 1999 yang dicatat oleh Komisi

Daftar grafik:

- 1535** | **Grafik 1** : Bagan jumlah tindakan pelanggaran nonfatal yang dilaporkan, 1974 – 1999
- 1536** | **Grafik 2** : Bagan jumlah pelanggaran yang dilaporkan, berdasarkan jenis pelanggaran dan distrik
- 1537** | **Grafik 3** : Bagan jumlah tindakan penahanan yang dilaporkan, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 – 1999
- 1537** | **Grafik 4** : Bagan jumlah penyiksaan yang dilaporkan, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 – 1999
- 1539** | **Grafik 5** : Bagan pelanggaran lintas-waktu, 1974 – 1999
- 1539** | **Grafik 6** : Bagan pelanggaran lintas-waktu, 1974 – 1999
- 1540** | **Grafik 7** : Bagan jumlah pelanggaran nonfatal lintas-waktu, 1974 – 1999, yang dilakukan oleh polisi
- 1541** | **Grafik 8** : Bagan pelanggaran lintas-waktu, 1974 – 1999
- 1547** | **Grafik 9** : Bagan jumlah penahanan yang dilaporkan, yang dilakukan oleh UDT, berdasarkan distrik, 1974 – 1979
- 1604** | **Grafik 10**: Bagan jumlah tindakan penahanan yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil terhadap anggota Fretilin/Falintil, berdasarkan distrik, 1974 – 1979
- 1638** | **Grafik 11**: Jumlah tindakan penyiksaan yang dilaporkan, 1974 – 1979
- 1638** | **Grafik 12**: Bagan jumlah penahanan yang dilaporkan, 1974 – 1979

- 1639** | **Grafik 13:** Bagan jumlah penganiayaan yang dilaporkan, 1980 – 1989
- 1640** | **Grafik 14:** Bagan jumlah penahanan, menurut pelaku, 1974 – 1979
- 1641** | **Grafik 15:** Bagan jumlah penyiksaan, menurut pelaku, 1974-1979
- 1692** | **Grafik 16:** Bagan tindakan penahanan yang dilaporkan, 1980 – 1989
- 1692** | **Grafik 17:** Bagan tindakan penyiksaan yang dilaporkan, 1980 – 1989
- 1693** | **Grafik 18:** Bagan jumlah penganiayaan yang dilaporkan, 1980 – 1989
- 1694** | **Grafik 19:** Bagan pelanggaran lintas-waktu, 1974 – 1999
- 1694** | **Grafik 20:** Bagan pelanggaran secara lintas-waktu, 1974 – 1999
- 1695** | **Grafik 21:** Bagan pelanggaran lintas-waktu, 1974 – 1999
- 1702** | **Grafik 22:** Bagan jumlah orang yang ditahan di Atauro, Juni 1980 – Oktober 1984
- 1703** | **Grafik 23:** Bagan jumlah penahanan yang dilaporkan, di dalam dan di luar Atauro, 1974 – 1999
- 1742** | **Grafik 24:** Bagan pelanggaran lintas-waktu, 1974 – 1999
- 1804** | **Grafik 25:** Bagan tindakan penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pembantu Timornya, 1999
- 1808** | **Grafik 26:** Bagan penyiksaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pembantu Timornya, 1999
- 1808** | **Grafik 27:** Bagan penganiayaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pembantu Timornya, 1999
- 1809** | **Grafik 28:** Bagan penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pembantu Timornya, 1974 - 1999

Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan 4.

Pendahuluan

1. Penahanan sewenang-wenang atau yang juga dikenal sebagai pencabutan kebebasan sewenang-wenang, diderita oleh lebih banyak orang Timor dibandingkan pelanggaran lainnya. Penahanan sewenang-wenang ini terjadi selama seluruh periode konflik di Timor-Leste, baik selama konflik politik internal maupun konflik dengan Indonesia, dan ini terjadi di semua distrik. Meskipun semua pihak yang terlibat dalam konflik pernah menahan orang secara sewenang-wenang, anggota pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab atas mayoritas sangat besar kasus yang didokumentasikan oleh Komisi.
2. Penahanan sewenang-wenang penting dibahas bukan hanya karena ia sendiri merupakan pelanggaran, tetapi juga karena penahanan membuka peluang bagi banyak pelanggaran lainnya. Penganiayaan dan penyiksaan (pelanggaran urutan ketiga dan keempat dalam hal frekuensi kejadian) amat kerap terjadi saat korban berada dalam penahanan. Bab-bab lain dalam laporan ini juga menemukan bahwa kekerasan seksual, eksekusi serta penghilangan, perekrutan paksa, kerja paksa, penjarahan, dan pemindahan paksa sangat sering terjadi saat korban berada dalam penahanan, yang artinya berada di bawah kekuasaan pelaku penahanan.
3. Banyaknya rakyat Timor-Leste yang menderita karena dikurung dan diperlakukan kejam secara fisik mengungkap adanya periode 24 tahun kebrutalan dan penggunaan kekerasan secara berulang-ulang untuk menghancurkan oposisi politik yang akhirnya berpuncak pada kekerasan dan penghancuran pada 1999. Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan menyimpulkan dalam laporannya pada Januari 1992 bahwa penyiksaan lazim terjadi di Timor-Leste.* Sebagaimana yang

* Pelapor Khusus PBB mengemukakan 11 rekomendasi agar dilaksanakan oleh pihak berwenang Indonesia untuk mengakhiri penyiksaan. Hanya dua dari rekomendasi itu yang dilaksanakan, yakni pembentukan sebuah Komisi HAM Nasional dan pengakuan terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan

akan dipaparkan dalam bab ini, kejadian pelanggaran seperti ini terlalu sering dimaklumi, diabaikan, atau bahkan dilakukan oleh pihak yang berkuasa di setiap tahap konflik. Impunitas atas tindakan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan sudah lazim.

4. Bab ini mencermati sifat dan cakupan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan selama periode 1975-1999.' Hanya ada sedikit sekali kasus yang dilaporkan pada 1974, yakni awal periode mandat. Diharapkan bahwa dengan meneliti berbagai pola ini serta struktur dan strategi di baliknya, rakyat Timor-Leste bisa memahami bagaimana pelanggaran ini bisa terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi lagi.

Definisi dan prinsip hukum

Penahanan sewenang-wenang

5. Hukum Internasional Hak-hak Asasi Manusia (HAM) menjamin bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan dan berhak bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh negara.¹

Penangkapan

6. Dalam Laporan ini, Komisi telah menggunakan kata 'penangkapan' secara luas untuk menggambarkan proses ketika seseorang dibawa untuk ditahan, tanpa memandang apakah proses itu dilakukan oleh pihak berwenang yang tepat, yang bertindak dalam jalur hukum atau tidak.

Penahanan dan pemenjaraan

7. Kata 'penahanan' atau 'pemenjaraan' telah digunakan untuk mengacu kepada pencabutan-paksa kebebasan dalam bentuk apapun, baik itu di lingkungan penjara resmi ataupun tempat lainnya. Maksudnya, penahanan adalah suatu situasi di mana seseorang ditahan di dalam suatu wilayah terkurung, yang bertentangan dengan kehendaknya.

8. Dalam hukum internasional, penahanan dianggap sewenang-wenang bila terjadi hal-hal berikut ini:

- Tidak ada dasar hukum untuk membenarkan penahanan
- Penahanan terjadi sebagai akibat dijalankannya hak-hak asasi secara sah (misalnya kebebasan berbicara atau berpendapat)

.....
Perlakuan atau Penghukuman lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat. Namun, yang disebutkan terakhir tadi tidak dilaksanakan sampai 1998.

* Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, berbagai laporan tentang pembunuhan dan penghilangan paksa.

- Situasi penahanannya melibatkan berbagai pelanggaran HAM yang sedemikian parah sehingga penahanan tersebut bisa dianggap sewenang-wenang (misalnya, bila tidak ada proses peradilan atau persidangan yang adil)²

9. Dalam sebuah konflik bersenjata, diperkenankan untuk menangkap petempur musuh dan menahannya sebagai tawanan perang. Namun, berdasarkan hukum pidana domestik, penduduk sipil tidak boleh ditahan tanpa ada alasan sah untuk melakukannya.

10. Bila seorang warga sipil atau petempur yang secara hukum tidak sah, ditahan berdasarkan tuntutan pidana, orang itu harus segera (dalam beberapa hari)³ dibawa ke hadapan hakim dan harus disidangkan dalam waktu yang wajar atau (bila tidak) dilepaskan.⁴ Kalau ini tidak terjadi, penahanan itu bisa dianggap sewenang-wenang.

11. Komisi mencatat bahwa berbagai standar ini digunakan hanya sebagai panduan bagi penelitian yang dilakukan oleh Komisi dan Komisi tidak menghasilkan temuan dalam setiap kasus apakah penahanan dianggap sewenang-wenang atau tidak.

12. Menurut hukum Indonesia, penculikan atau pelanggaran hak atas kebebasan seseorang dilarang.⁷ Pelanggaran inipun berlaku setara bagi para pejabat serta anggota angkatan bersenjata Indonesia dan hukuman digariskan akan lebih berat apabila seorang pejabat menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pelanggaran.[†] Hukum pidana Portugis melarang penahanan, penangkapan, atau pengendalian seseorang secara tidak sah.[‡]

Penyiksaan

13. Penyiksaan dianggap sebagai pelanggaran HAM berat dan mutlak dilarang dalam segala situasi.⁵

14. Dalam hukum internasional, ‘penyiksaan’ terjadi ketika seseorang dengan sengaja disakiti dengan parah atau dibuat menderita, biasanya dengan maksud menghukum, mengintimidasi, memaksa, mendapatkan informasi atau pengakuan, atau dengan alasan apapun yang didasarkan atas diskriminasi.⁶ Meski definisi ini juga mensyaratkan adanya keterlibatan negara dalam melakukan tindak penyiksaan, Komisi berpandangan (berdasarkan kewenangan dari badan-badan internasional lain), bahwa di bawah hukum kebiasaan, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku non-negara tanpa persetujuan dari negara juga bisa dianggap sebagai penyiksaan.⁷

.....
* Pasal 328 dan 333 KUHP.

† Pasal 421 52 KUHP.

‡ Pasal 330 Hukum Pidana/Kejahatan Portugis .

Perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (penganiayaan)

15. Bilamana suatu tindakan kurang memenuhi syarat untuk bisa disebut penyiksaan, baik karena tidak cukup parah atau karena tidak secara jelas dilakukan dengan salah satu dari alasan-alasan yang disyaratkan, ia masih bisa dianggap sebagai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (secara umum disebut sebagai penganiayaan). Ini mencakup, misalnya, pengurangan terisolasi,⁸ pelarangan untuk tidur,⁹ mengekang seseorang dalam posisi yang menyakitkan,¹⁰ menutupi kepala seseorang,¹¹ dan memberi ancaman mati kepada seseorang.¹² Penganiayaan dalam keadaan apapun juga dilarang oleh hukum internasional.¹³

16. Bila berbagai kondisi di mana seorang ditahan gagal memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh hukum internasional, maka itu bisa dianggap sama dengan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.¹⁴ Hukum internasional mensyaratkan bahwa semua tahanan harus diperlakukan manusiawi.¹⁵ Mereka tidak boleh disengsarakan atau dikenai pembatasan-pembatasan, kecuali yang diakibatkan oleh pencabutan kebebasan itu sendiri, dan harus diperbolehkan menikmati segala hak asasi manusia sesuai dengan berbagai pembatasan yang tak terhindarkan dalam suatu lingkungan tertutup.¹⁶ Secara khusus, pengurangan terisolasi yang berkepanjangan atau penahanan yang tidak memperbolehkan hubungan dengan orang lain bisa melanggar standar tersebut.¹⁷

17. Standar yang lebih khusus dimuat dalam berbagai instrumen internasional seperti: Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang yang Berada dalam Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun (*Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*); Prinsip-prinsip Dasar bagi Perlakuan terhadap Tahanan (*Basic Principles for the Treatment of Prisoners*); dan Aturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Tahanan (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner*). Standar tersebut mencakup berbagai persyaratan bahwa orang yang ditahan harus diberi hal-hal berikut ini:

- Tempat tinggal yang memenuhi semua syarat kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi iklim, volume udara, luas lantai minimum, penerangan, dan ventilasi
- Jendela dan lampu yang cukup untuk memungkinkan ventilasi dan penerangan yang memadai
- Fasilitas toilet yang memungkinkan penggunaan secara bersih dan layak
- Fasilitas mandi yang memadai
- Sebuah tempat tidur yang terpisah dan bersih untuk masing-masing tahanan
- Makanan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan kesehatan dan kekuatan
- Air minum kapanpun dibutuhkan
- Kesempatan reguler untuk berolahraga

- Akses ke perawatan medis
- Kesempatan berkomunikasi dengan teman-teman dan keluarga dengan cara surat-menyurat dan menerima kunjungan
- Akses ke buku, surat kabar, dan berbagai sumber informasi lainnya
- Kemampuan memenuhi kebutuhan kehidupan keagamaan sejauh yang bisa dipraktikkan

18. Tidak semua dari syarat-syarat ini mengikat dengan sendirinya, namun persyaratan tersebut menyediakan standar yang membantu menentukan kapan kewajiban umum untuk memperlakukan tawanan dengan manusiawi serta penghormatan terhadap martabat yang melekat pada orang itu telah dilanggar.

Pembedaan antara penganiayaan dan penyiksaan

19. Komisi mencatat bahwa sering sulit menarik garis pembeda antara penyiksaan dan penganiayaan, karena mencakup berbagai persoalan tentang fakta dan kadarnya. Khususnya dari sudut pandang pertimbangan bahasa—istilah ‘penyiksaan’ dalam bahasa Indonesia lazim digunakan untuk mencakup kisaran luas bentuk-bentuk penganiayaan, mulai dari penganiayaan ringan sampai penyiksaan berat—tidak selalu mudah bagi Komisi untuk menentukan pelanggaran mana yang telah terjadi dalam suatu kasus siksaan fisik atau emosi tertentu. Lebih jauh lagi, karena korban sering tidak menyadari perbedaan hukum yang tipis seperti itu, maka mereka tidak selalu menguraikan apa yang mereka derita secara cukup terperinci agar pengalamannya bisa diklasifikasikan berdasarkan hukum internasional.

20. Karena Komisi bukanlah sebuah pengadilan, bukanlah hal yang hakiki bagi Komisi untuk menghasilkan temuan mengenai sifat hukum dari pengalaman korban. Selama perlakuan tersebut tidak jelas-jelas masuk dalam satu kategori atau kategori lainnya, maka Komisi tidak menggolongkan perlakuan tersebut ke dalam salah satu kategori, melainkan memaparkan berbagai tindakan khusus penyiksaan fisik atau emosi yang diderita oleh korban. Dalam kasus di mana korban tidak memerinci berbagai bentuk khusus siksaan dan hanya menguraikan pengalamannya sebagai ‘penyiksaan’, maka uraian ini diterima untuk keperluan statistik.

Berbagai larangan sesuai dengan hukum setempat terkait penyerangan dan penganiayaan

21. Berkait dengan penganiayaan dan penyiksaan, sebagai tambahan pada standar internasional, hukum domestik pun melarang dan memidana perlakuan yang terkait dengan berbagai macam bentuk serangan fisik dan penganiayaan. Sesuai dengan hukum pidana Indonesia, ‘penganiayaan’ terhadap seseorang harus dihukum dan hukuman yang lebih berat ditetapkan pada kasus di mana penganiayaan mengakibatkan cedera fisik yang serius atau kematian, atau dilakukan secara

berencana.^{*} Secara sengaja menyebabkan cedera fisik yang serius pada orang lain merupakan suatu kejahatan.[†] Pelanggaran ini diberlakukan setara pada para pejabat termasuk anggota angkatan bersenjata Indonesia dan berbagai hukuman dikhususkan lebih tinggi pada kasus di mana seorang pejabat menggunakan kekuasaannya untuk melakukan suatu pelanggaran.[‡] Sebagai tambahan, beberapa perbuatan khusus oleh para pejabat dilarang, termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pejabat untuk memaksa seseorang melakukan, membiarkan, atau menolerir sesuatu;[§] dan penggunaan pemaksaan/intimidasi oleh seorang pejabat untuk memperoleh pengakuan atau pernyataan pada kasus-kasus pidana.[¶] Hukum pidana Portugis juga melarang penyerangan fisik, khususnya apabila hal ini menyebabkan penyakit, cedera, kerugian psikologis, atau kematian.^{**}

Pola-pola penahanan, penganiayaan, dan penyiksaan selama periode mandat

22. Seperti telah disebutkan di atas, penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan termasuk di antara berbagai pelanggaran yang paling sering dilaporkan di sepanjang periode mandat. Dari seluruh pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi, 42,3%-nya (25.347/59.972) adalah penahanan; 18,5%-nya (11.123/59.972) adalah tindak penyiksaan; dan 14,1%-nya (8.436/59.972) adalah tindak penganiayaan.^{††} Hampir 67%, atau dua per tiga, dari korban pelanggaran nonfatal melaporkan pernah ditahan pada waktu tertentu. Sebagian besar penyiksaan dan penganiayaan terjadi saat berada dalam penahanan.

Pola lintas-waktu

23. Kejadian penahanan sewenang-wenang tidaklah seragam sepanjang periode mandat. Grafik di bawah ini menunjukkan pola penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan lintas waktu.

* Pasal 351-353 KUHP.

† Pasal 354-355 KUHP.

‡ Pasal 421 52 KUHP.

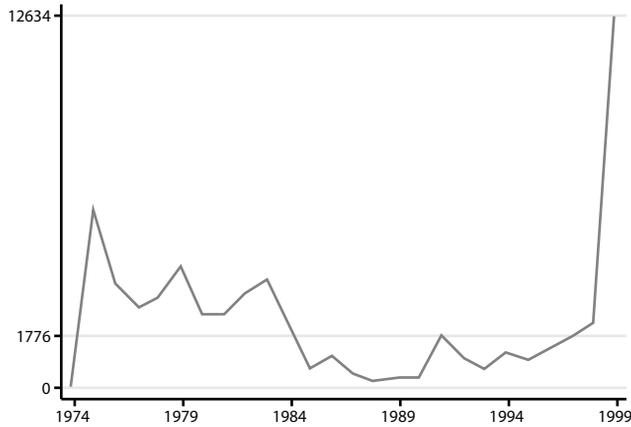
§ Pasal 421 KUHP.

¶ Pasal 422 KUHP.

** Pasal 359, 360, dan 361 Kode Kriminal/Kejahatan Portugis.

†† Jumlah-jumlah ini samasekali tidak mewakili jumlah total kasus penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan yang telah terjadi di Timor-Leste selama periode ini. Jumlah tersebut merupakan hasil dari pernyataan dari hanya sekitar 1% penduduk dan belum "disesuaikan" secara statistik, dengan akibat dua pernyataan bisa saja mengacu kepada kejadian penahanan, penyiksaan, ataupun penganiayaan yang sama [lihat Bagian 6: Profil pelanggaran hak asasi manusia].

Bagan jumlah tindakan nonfatal yang dilaporkan, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

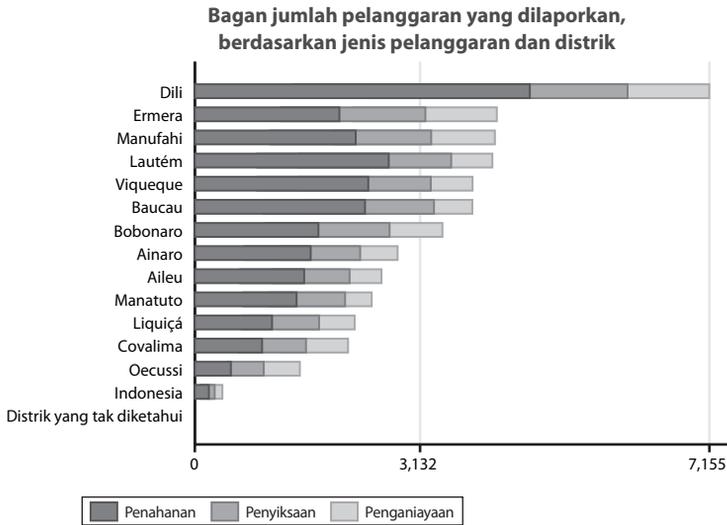
24. Bagan ini mengungkap bahwa ketiga pelanggaran itu mengikuti pola serupa dan bahwa ada dua puncak tingkat pelanggaran seperti itu: pada 1975 selama periode konflik politik internal dan invasi Indonesia ke wilayah ini, dan pada 1999 ketika penduduk Timor-Leste memilih kemerdekaan dan militer Indonesia pergi. Namun demikian, selama periode 1976 - 1984 ketika dilakukan operasi-operasi militer Indonesia besar-besaran untuk menaklukkan Timor-Leste dan menghancurkan resistansi, penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan terjadi dalam skala besar. Selama periode 14 tahun, yakni 1985 - 1998, ketika Timor-Leste dianggap sebagai sebuah provinsi Indonesia yang normal, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan masih dilaporkan terjadi setiap tahun dalam skala kekerasan tingkat rendah yang sporadis.

25. Pola ini sesuai dengan pola pelanggaran fatal: pada masa-masa ketika makin banyak orang ditahan secara sewenang-wenang dan disiksa secara fisik, juga makin banyak orang yang dibunuh (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

Pola lintas-ruang

26. Pola lintas-ruang juga tidak seragam di seluruh konflik. Dalam tahun-tahun pertama periode mandat, jumlah tertinggi penahanan serta kasus penganiayaan dan penyiksaan terjadi di distrik-distrik barat. Pada 1980, situasi ini telah berpindah secara mencolok ke distrik-distrik timur, tempat berbasisnya gerakan resistansi dan paling banyak aktivitas resistansi terjadi dan ini berlanjut sampai 1984. Antara 1985 dan 1998, ada kekerasan sporadis dengan tingkatan serupa di semua kawasan di wilayah ini, namun tidak di semua distrik di setiap tahun. Pada 1999, distrik-distrik yang dekat dengan perbatasan—Bobonaro, Covalima, dan Liquiçá—kembali mengalami paling banyak kekerasan.

27. Secara keseluruhan, jumlah tertinggi orang yang ditahan selama periode mandat (18% dari total laporan) ditahan di Dili, disusul Lautém, Viqueque, dan Baucau (kawasan timur). Jumlah paling sedikit kasus yang terdokumentasi berasal dari Oecussi (0,8%),* disusul Distrik Covalima dan Distrik Liquiçá. Penyiksaan dan penganiayaan, meski yang tertinggi terjadi di Dili (12% dan 13% secara berurutan dari total kasus yang dilaporkan), namun juga paling sering terjadi di Distrik Ermera dan Distrik Manufahi.



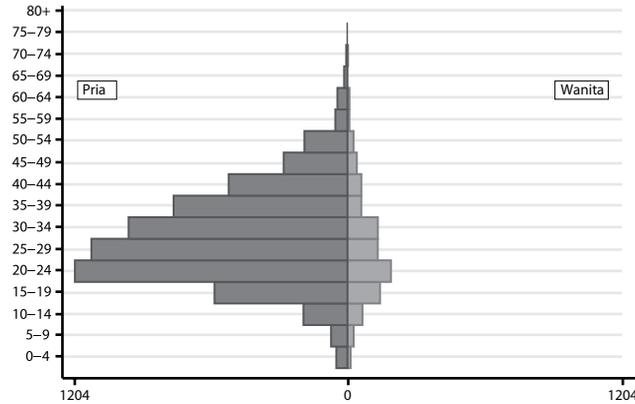
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Korban

28. Proses pengambilan pernyataan oleh Komisi mengidentifikasi 17.169 korban penahanan sewenang-wenang, 8.508 korban penyiksaan, dan 6.872 korban penganiayaan. Dari kasus tersebut jelaslah bahwa para pemuda dalam usia yang layak menjadi anggota militer dan terlibat dalam Fretilin/Falintil atau kelompok lain yang menentang pendudukan Indonesia, mengalami sebagian besar pelanggaran.

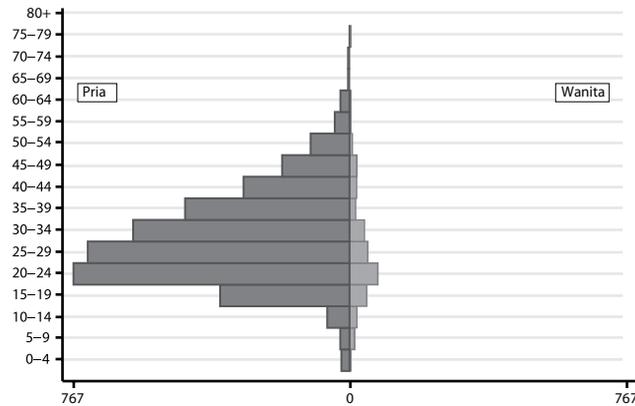
* Sampai 1999, hampir tidak ada kasus penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan di daerah kantong Oecussi, selain dari yang terjadi pada 1975. Situasi ini berubah pada 1999 ketika kekerasan yang dilakukan oleh milisi melanda daerah ini.

Bagan jumlah tindakan penahanan yang dilaporkan, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
 Catatan: 72,4% data tidak merekam usia dan jenis kelamin

Bagan jumlah penyiksaan yang dilaporkan, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
 Catatan: 63,9% data tidak merekam usia dan jenis kelamin

Gender

29. Secara keseluruhan, perempuan merupakan 13,9% dari korban dalam kasus penahanan sewenang-wenang; 12,3% korban dalam kasus penyiksaan; dan 7,7% korban dalam kasus penganiayaan. Bias gender yang kuat ini mencerminkan bahwa laki-laki berada di garis depan dalam konflik, bertarung dalam konflik politik internal, dan ambil bagian dalam perlawanan bersenjata ataupun jaringan klandestin selama pendudukan, dan juga bahwa lebih sedikit perempuan yang tampil ke muka untuk memberikan pernyataan dibandingkan laki-laki. Hanya 21% pernyataan dalam proses pengambilan pernyataan oleh Komisi diberikan oleh perempuan.

Afiliasi

30. Para korban penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan terutama adalah anggota gerakan Resistansi dan anggota klandestin, para mahasiswa, dan para pendukung sebenarnya ataupun orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan. Banyak orang yang walaupun hanya tak langsung terlibat dalam perjuangan juga ditahan dan disiksa. Anggota keluarga dan teman dari orang-orang yang dituduh sebagai pemberontak dan anggota klandestin ditahan, sering dalam upaya untuk mengisolasi orang-orang—yang dituduh sebagai anggota gerakan Resistansi bersenjata atau klandestin—dari jaringan pendukung mereka, dan dengan demikian memaksa mereka menyerah. Kerabat dan rekan sejawat juga ditahan, disiksa, dan dianiaya untuk mengorek informasi dari mereka tentang keberadaan dan berbagai aktivitas anggota keluarga atau sejawat mereka yang dicurigai. Contoh hal ini adalah ratusan keluarga yang dikirim oleh penguasa Indonesia ke Ataúro di awal 1980-an karena mereka punya anggota keluarga di dalam gerakan Resistansi atau berasal dari berbagai daerah yang perlawanannya gigih. Ini berarti, hanya beberapa di antara kasus penahanan, penyiksaan, atau penganiayaan yang dilaporkan kepada Komisi merupakan penyerangan serampangan tanpa motivasi politik terhadap masyarakat sipil. Hanya sedikit dari para korban yang merupakan orang Timor-Leste yang bekerjasama dengan Indonesia.

Besaran kelompok

31. Kebanyakan korban ditahan secara perseorangan; menunjukkan bahwa mereka ditargetkan khusus oleh pelaku. Namun hampir sama banyak korban melaporkan telah ditahan sebagai bagian dari kelompok sebesar 98 orang atau lebih. Penahanan individu dan penahanan kelompok berkait erat—ketika makin banyak terjadi penangkapan individu, makin banyak pula penangkapan massal. Polanya berubah sepanjang waktu. Setiap tahun antara 1975 sampai 1984, kecuali pada 1983, lebih banyak orang yang ditangkap dalam kelompok besar daripada yang ditangkap secara perseorangan. Sedangkan antara 1985 sampai 1998, lebih banyak orang yang ditahan secara individual daripada yang ditahan dalam kelompok besar. Ini menunjukkan bahwa penahanan oleh aparat keamanan Indonesia menjadi lebih strategis dan semakin terarah sasarannya kepada perorangan menjelang tahun-tahun terakhir pendudukan.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

32. Penyiksaan dan penganiayaan jelas lebih sering dialami secara individu dibanding secara kelompok. Namun, golongan tertinggi kedua untuk dua jenis pelanggaran itu adalah kelompok-kelompok yang terdiri atas 98 orang atau lebih, dan dalam dua tahun, yakni 1975 dan 1982, lebih banyak orang melaporkan telah disiksa dalam kelompok besar dibandingkan secara perseorangan. Penyiksaan dan penganiayaan terhadap kelompok besar terjadi setelah kelompok tersebut ditahan dan dipukuli oleh para pelaku atau ditahan dalam kondisi buruk, yang bisa dianggap sebagai perlakuan tak manusiawi.



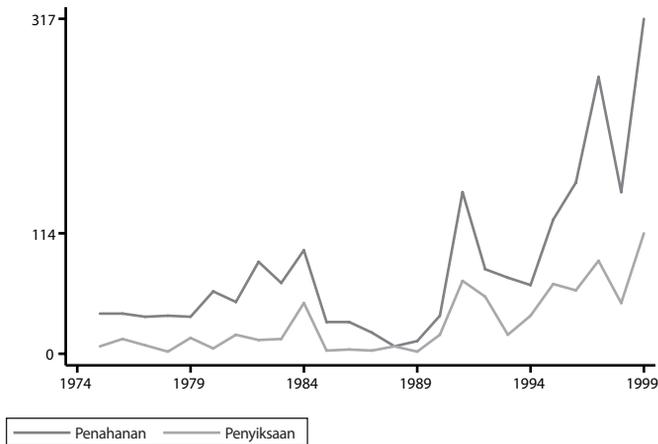
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Pelaku kelembagaan

33. Pelaku penahanan sewenang-wenang, penganiayaan, dan penyiksaan yang sering muncul, jauh di atas kelompok pelaku lainnya, adalah militer dan polisi Indonesia, bersama pasukan pembantu mereka. Mereka secara bersama terlibat langsung pada 82,2% (20.867/25.383) kasus penahanan sewenang-wenang dan 82,4% (16.135/19.578) kasus penyiksaan dan penganiayaan.

34. Jika gambaran tentang pelaku ini dijabarkan, sangat jelas bahwa para anggota militer dan polisi Indonesia yang bertindak sendiri tetap merupakan pelaku terbesar. Dari para korban yang melaporkan kasus penahanan sewenang-wenang, 48,1% (12.212/25.383) menunjuk anggota ABRI/TNI sebagai pelaku tunggal, sedangkan dari para korban penyiksaan serta berbagai tindakan penganiayaan, 45,5% (8.890/19.578) melaporkan hal yang sama. Berbagai jawatan ABRI bertanggung jawab pada kurun waktu yang berbeda-beda. Pada tahun-tahun awal, berbagai batalion dan para komandannya disebutkan dalam sebagian besar penahanan, penganiayaan, dan penyiksaan karena berbagai kasus itu terjadi selama operasi militer. Pada akhir 1970-an, berbagai kesatuan yang membentuk bagian dari struktur teritorial, seperti komando distrik militer (Kodim) dan komando rayon militer (Koramil), paling sering disebut. Polisi menjadi lebih aktif pada periode akhir masa pendudukan, yakni ketika prosedur hukum dalam hal penahanan di wilayah ini telah dinormalisasi. Dengan kenyataan bahwa sasaran utama aparat keamanan selama pendudukan adalah para anggota Resistansi baik bersenjata maupun klandestin, maka selama pendudukan berbagai dinas intelijen dan Pasukan Khusus (Kopassandha/Kopassus) sering melakukan penangkapan, penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan, baik langsung ataupun tak langsung, misalnya dengan memerintah atau mendorong pasukan-pasukan pembantu Timor-Leste semacam Hansip atau kelompok-kelompok milisi untuk melakukan pelanggaran.

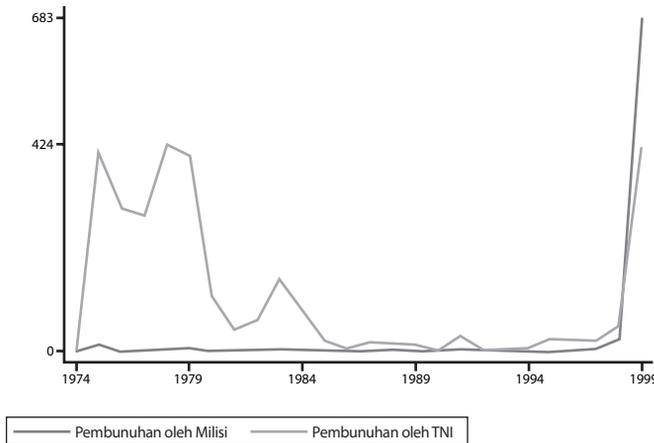
Bagan pelanggaran nonfatal lintas-waktu, 1974-1999, yang dilakukan oleh Polisi



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

35. Para kolaborator asal Timor-Leste yang bekerjasama dengan ABRI (seperti pertahanan sipil, pejabat pemerintah lokal, petugas ‘pembina desa’, serta kelompok-kelompok paramiliter dan milisi) disebutkan terlibat sebagai pelaku tunggal pada hanya 12,3% (3.126/25.383) kasus penahanan dan 22,4% (4.380/19.578) kasus-kasus lainnya. Tabel berikut ini menunjukkan keterlibatan militer dibandingkan dengan kolaborator orang Timor-Leste yang memainkan peran pembantu ini dalam kasus-kasus penahanan saja. Jelaslah bahwa militer Indonesia merupakan pelaku institusional utama dalam semua tahun kecuali 1999.

Bagan pelanggaran lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

36. Resistansi diidentifikasi sebagai pelaku kelembagaan dalam 13% kasus penahanan, 11% kasus penyiksaan, dan 13% kasus penganiayaan. Sebagian besar kasus ini terjadi pada 1975 selama periode konflik bersenjata internal dan antara 1976 sampai 1979 ketika perpecahan internal di dalam Fretilin sedang pada puncaknya.

Tabel 1: Pelanggaran oleh kelompok pelaku kelembagaan*

| Jenis Pelanggaran | ABRI/TNI sendiri | Pasukan pembantu Timor-Leste sendiri | ABRI/TNI dengan pasukan pembantu Timor-Leste | Fretilin/Resistensi | UDT | Penduduk sipil | Pro-otonomi | Tidak dilaporkan [†] | Hitungan kekerasan |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| Penahanan | 12.212 (48,1%) | 3.126 (12,3%) | 5.557 (21,9%) | 3.309 (13%) | 984 (3,9%) | 772 (3%) (0,9%) | 222 (0,9%) | 14 (0,1%) | 25.383 |
| Penyiksaan dan penganiayaan | 8.890 (45,4%) | 4.380 (22,4%) | 2.880 (14,7%) | 2.250 (11,5%) | 747 (3,8%) | 509 (2,6%) | 157 (0,8%) | 27 (0,1%) | 19.578 |

Tempat orang ditahan

37. Proses analisis data Komisi tidak menganalisis jenis tempat yang digunakan untuk menahan korban. Namun demikian, ulasan kualitatif atas pernyataan korban dan informasi yang diperoleh melalui wawancara serta Profil Komunitas telah mengungkap beberapa pola.

38. Pertama, tempat yang digunakan untuk menawan tahanan sangat beragam. Selama konflik bersenjata internal dan periode pemerintahan Fretilin, baik UDT maupun Fretilin menggunakan tempat apapun yang ada. Di beberapa tempat, ini berupa bangunan-bangunan besar seperti gudang, barak militer, ataupun aula sekolah; di tempat-tempat lain, ia berupa kurungan yang menyerupai kandang ayam, gubuk bambu, ataupun lubang di dalam tanah. Militer Indonesia melanjutkan pola ini setelah mereka melakukan invasi pada 1975 dan sebelum mereka membangun struktur militernya sendiri. Pada pertengahan 1976, militer telah mendirikan berbagai komando militer dan kantor polisi, serta mulai menggunakan tempat tersebut serta gedung militer lainnya, seperti barak dan aula mes, untuk menahan dan menyiksa korban. Banyak korban berkali-kali dipindah-pindahkan dari dan ke berbagai pusat penahanan, ke ribuan orang dikirim, jauh dari teman dan keluarga mereka, ke bagian lain wilayah Timor-Leste, termasuk ke Pulau Atauro atau ke bagian tertentu di Indonesia. Lampiran dalam laporan ini memuat daftar semua pusat penahanan di semua distrik yang dilaporkan oleh pemberi pernyataan. Daftar ini tidak menyeluruh, tapi memberikan gambaran tentang jumlah dan ragam tempat yang digunakan.

* Perlu diperhatikan bahwa hitungan pelanggaran total bukan jumlah dari seluruh angka di tabel ini, karena untuk banyak kasus pemberi pernyataan mengidentifikasi lebih daripada satu pelaku institusional [lihat Bagian 6: Profil pelanggaran hak asasi manusia].

† Di sini, pemberi pernyataan pada pernyataannya tidak mengidentifikasi afiliasi institusi pelaku.

39. Kedua, di sepanjang periode mandat, khususnya di tahun-tahun awal dan pada 1999, kondisi penahanan selalu berada jauh di bawah standar minimum yang dapat diterima secara internasional. Korban yang ditahan, baik oleh partai politik (UDT dan Fretilin) maupun oleh berbagai aparat keamanan Indonesia beserta bawahannya, sering dilaporkan menderita kekurangan makanan, sanitasi dan ventilasi yang tidak memadai, kondisi terlalu berjejal, dan periode panjang pengurungan terisolasi. Pemukulan dan bentuk-bentuk siksaan fisik lainnya berlangsung terus-menerus. Banyak orang mati dalam penahanan atau cedera sedemikian parah sehingga mereka tidak pernah bisa hidup normal lagi. Penguasa Indonesia jelas-jelas merupakan pihak yang paling sering bersalah, sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya jumlah orang yang menderita, sifat sistematis dari pelanggaran, dan panjangnya periode saat kejadian-kejadian tersebut berlangsung.

Struktur bab dan temuan utama

40. Bab ini disusun berdasarkan periode waktu maupun para pelakunya. Mengingat jumlah besar kasus penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan, mustahil memasukkan setiap kesaksian deponen ke dalam bab ini. Hal ini hendaknya tidak dianggap menyiratkan bahwa kesaksian seorang deponen lebih atau kurang berharga dibandingkan kesaksian deponen lainnya, melainkan hanya karena keterbatasan ruang perlulah kiranya menyebutkan kasus-kasus yang dapat menunjukkan pola umum.

41. Komisi telah memperhatikan pola-pola tentang siapa yang menderita pelanggaran-pelanggaran ini, siapa yang melakukan pelanggaran, dan strategi atau kebijakan apa (atau ketiadaan strategi atau kebijakan apa) yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ini. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang sederhana. Para deponen menguraikan apa yang terjadi pada mereka dalam cara sebagaimana yang mereka alami. Banyak korban bahkan tidak mengetahui siapa yang melakukan pelanggaran, apalagi mengetahui siapa yang memerintahkannya atau apa kebijakan di baliknya. Meski demikian, setelah mengulas ribuan kesaksian seperti itu, Komisi sedikit demi sedikit bisa mengumpulkan pola-pola tertentu yang jelas dan menentukan siapa yang bertanggung jawab.

42. Pengalaman korban disimpulkan bukan hanya dari pernyataan, tetapi juga dari wawancara luas yang dilakukan oleh tim peneliti Komisi antara 2002 sampai 2004. Pengalaman komunitas secara keseluruhan, sebagaimana diperinci dalam berbagai Profil Komunitas, juga menjadi alat penelitian yang berharga.

Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh UDT, 1975

43. Bagian pertama ini mencermati sifat dan cakupan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh UDT dalam gerakan bersenjata pada 11 hingga 20 Agustus 1975. Bagian ini mencermati alasan penahanan dan kemudian pola-pola penahanan, penganiayaan, dan penyiksaan

distrik demi distrik. Komisi telah menemukan bahwa strategi kunci dari usaha gerakan bersenjata itu adalah penahanan para pemimpin dan anggota biasa dari partai oposisi utama, Fretilin. Komisi telah menerima kesaksian tentang orang-orang yang ditahan secara sewenang-wenang di semua distrik Timor-Leste kecuali di daerah kantong Oecussi, namun konsentrasi tawanan terbesar ada di Distrik Dili, Ermera, dan Manufahi. Sebagian besar orang yang ditahan oleh UDT ditahan dalam kondisi yang sedemikian buruk, sering tanpa makanan ataupun air minum, sehingga sebagian mati dalam penahanan. Pemukulan dan bentuk-bentuk siksaan fisik lainnya terjadi secara meluas, namun penyiksaan hanya terjadi di sana-sini dan tidak dilakukan secara sistematis. Karena usaha perebutan kekuasaan itu berumur pendek, begitu pula sebagian besar masa penahanannya.

Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh Fretilin, 1975

44. Pasukan Fretilin mendeklarasikan Aksi Bersenjata pada 15 Agustus 1975. Fretilin menanggapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh UDT dengan garang, dengan menahan ratusan pemimpin dan pendukung UDT. Karena ancaman invasi Indonesia menjadi makin nyata, para pemimpin dan anggota Apodeti juga ditargetkan untuk ditahan. Banyak mantan tahanan Fretilin melaporkan telah mengalami pemukulan berat dan dalam beberapa kasus disiksa. Fretilin juga berbeda dengan UDT dalam hal ia secara aktif melibatkan penduduk sipil dalam penghukuman anggota-anggota UDT. Banyak tahanan mati atau terbunuh saat dalam penahanan. Setelah invasi Indonesia, Fretilin terus menahan beberapa ribu orang dalam penahanan, tidak memberi mereka makanan dan air minum, namun memaksa mereka melakukan kerja paksa seperti mengangkut barang-barang berat seperti amunisi dan persenjataan. Beberapa tahanan mati dalam kondisi demikian dan sebagian lainnya dieksekusi.

Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh Fretilin/Falintil, 1977 -1979

45. Indonesia belum menguasai sepenuhnya wilayah ini sampai awal 1979. Sampai saat itu, Fretilin menguasai sebagian cukup besar penduduk sipil. Di zona-zona yang dikontrol Fretilin, mereka membangun praktik peradilan yang sangat sederhana. Bagian ini menguraikan secara garis besar praktik peradilan tersebut, alasan-alasan orang ditahan dengan praktik ini, maupun perlakuan terhadap tahanan di beberapa distrik. Komisi menemukan bahwa penahanan sewenang-wenang terjadi secara luas dan tidak teratasi oleh praktik peradilan Fretilin. Penganiayaan dan penyiksaan juga terjadi secara luas dan di beberapa daerah terjadi secara sistematis. Penganiayaan dan penyiksaan itu terjadi baik selama interogasi maupun dalam penghukuman tahanan, dan sebagian bisa dijelaskan sebagai akibat kekurangan pangan yang akut di zona-zona Fretilin karena kebutuhan untuk harus terus bergerak menghindari pasukan penginvansi Indonesia dan karena tanaman pangan pada waktu itu dibakar oleh militer Indonesia.

Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh militer Indonesia dan kolaboratornya, 1975 - 1979

46. Data Komisi menunjukkan bahwa tahun-tahun puncak bagi penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan adalah tahun-tahun awal setelah invasi Indonesia atas Timor-Leste. Bagian ini mencermati pelanggaran-pelanggaran ini: di masa serbuan Indonesia di sepanjang perbatasan; selama dan segera setelah invasi atas Dili dan pusat-pusat lainnya yang berpenduduk banyak; ketika orang-orang menyerahkan diri; atau ketika mereka ditangkap dalam jumlah besar selama operasi-operasi militer yang dimaksudkan untuk menghancurkan Resistansi dan membawa seluruh penduduk ke bawah kontrol Indonesia. Komisi menemukan bahwa penahanan yang ditargetkan terhadap orang Timor-Leste yang diidentifikasi oleh pasukan keamanan Indonesia sebagai anggota Fretilin terjadi sejak hari invasi terhadap Dili. Seperti halnya penahanan yang bersasaran, penahanan massal terhadap berbagai komunitas yang menyerahkan diri atau tertangkap sering terjadi di sepanjang periode ini.

Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh militer Indonesia dan pasukan pembantunya asal Timor-Leste, 1980-84

47. Antara 1980 sampai 1984, operasi-operasi militer besar kembali dilakukan untuk menghancurkan apa yang tersisa dari Resistansi serta basis dukungan barunya di kota dan desa. Bagian ini bersifat kronologis dan meneliti tanggapan taktis militer terhadap Resistansi yang telah direformasi. Ini dimulai dengan serangan besar pertama oleh Resistansi ke sasaran stasiun penyiaran Marabia, setelah sebelumnya dianggap telah kalah, yang disusul dengan Operasi Keamanan dan pengiriman ribuan orang ke Pulau Ataúro, berikutnya penumpasan pemberontakan (*levantamentos*) di Gunung Kablaki, kontak damai dan masa setelahnya yang tragis pada 1983, tahun puncak bagi penahanan dan penyiksaan dalam periode ini, dan akhirnya penurunan kejadian penahanan pada 1984. Meski militer masih memainkan peran menonjol dalam periode ini, para pasukan pembantu asal Timor-Leste, seperti pasukan pertahanan sipil (*Hansip*), menjadi terlibat erat dalam menahan dan menyiksa orang-orang yang dicurigai. Periode ini juga penting diperhatikan mengingat adanya sejumlah penangkapan massal setelah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa Resistansi masih aktif. Seluruh keluarga ditahan selama beberapa tahun di Ataúro atau di desa-desa pemukiman kembali. Jumlah orang yang disiksa, dibandingkan dengan jumlah yang ditahan, meningkat setelah 1983 dan kecenderungan ini terus berlanjut selama sisa masa pendudukan.

Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh militer Indonesia dan pasukan pembantunya asal Timor-Leste, 1985 - 1998

48. Bagian ini mencermati sifat dan cakupan penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan selama periode panjang 'normalisasi' di Timor-Leste. Keputusan Indonesia untuk "membuka" Timor-Leste sejak akhir 1988, bersama dengan pengamatan internasional yang meningkat menyusul pembantaian Santa Cruz serta berkembangnya makna penting aktivitas klandestin dan diplomasi bagi

perjuangan Resistansi, berakibat pada munculnya pola-pola baru penangkapan dan penahanan pada akhir 1980-an dan selama 1990-an. Jumlah kasus penangkapan dan penahanan menurun selama periode ini, namun tindakan ini lebih terarah sasarannya. Juga terjadi penangkapan preventif, misalnya sebelum ada kunjungan oleh delegasi internasional. Meningkatnya mobilisasi pemuda oleh kedua belah pihak mengakibatkan terjadi banyak bentrokan spontan dan ledakan kekerasan di seputar isu agama, ekonomi, dan politik. Jumlah kejadian penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan mulai meningkat secara substansial sejak 1997.

Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh militer Indonesia dan pasukan pembantunya asal Timor-Leste, 1999

49. Tahun 1999 dibahas tersendiri, karena situasi pada tahun itu bersifat unik. Pengumuman tentang—dan persiapan untuk—sebuah Jajak Pendapat mendorong pihak militer Indonesia mengambil berbagai langkah drastis guna memengaruhi hasilnya. Bab ini mencermati para pelaku utama dan korban utama dari kekerasan nonfatal; alasan bagi penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan; pola-pola lintas waktu dan ruang; serta bentuk penahanan dan penyiksaan yang muncul pada 1999 dan menjadi ciri khas periode ini.

Penahanan dan penyiksaan oleh UDT, 1975

Pendahuluan

50. Gelombang penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan besar-besaran pertama dilakukan oleh Partai União Democrática Timorese (UDT) ketika melancarkan gerakan bersenjata pada Agustus 1975. Tindakan ini umum disebut sebagai ‘gerakan bersenjata’ atau gerakan antikomunis UDT 11 Agustus 1975 (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

51. Pada hari-hari pertama upaya gerakan bersenjata itu, para pendukung UDT menyerang dan membakar berbagai desa yang memiliki pendukung Fretilin yang kuat. Mereka menahan anggota Fretilin dan anggota Komite Sentral Fretilin (CCF). Siaran radio pagi pada 11 Agustus di Dili mendesak para pendukung UDT di seluruh distrik agar mengangkat senjata melawan Fretilin yang “komunis”, sehingga mendorong tindak kekerasan dan konflik antarpartis di semua wilayah kecuali Distrik Oecussi.*

* Di Oecussi, menurut *Relatorio da Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor*, situasi pada 11 Agustus tidak berubah. Oecussi tetap tenang pada 12 dan 13 Agustus dan juga pada malam hari 13-14 Agustus, ketika gubernur memberi arahan pada perwakilan satuan-satuan di Dili tentang situasi terakhir dan meminta mereka mencari solusi. Kompi Berkuda Oecussi mengatakan bahwa apapun keputusan yang dibuat oleh para perwakilan satuan-satuan di Dili itu, akan dipatuhi. Ketika itu Kota Aileu berada di bawah satuan *Metropolitano* (Polisi Metropolitan Portugis) yang tersisa dan sebagian besar anggota Komite Sentral Fretilin bermarkas di Aissirimou-Aileu hingga 15 Agustus. Karena itu dilaporkan bahwa UDT tidak memasuki daerah tersebut. Meskipun demikian, terdapat laporan tentang penahanan di bagian lain Kota Aileu, seperti gabungan antara UDT dan Apodeti menahan dua anggota Fretilin pada 11 Agustus di Seloi Malere. [Pernyataan HRVD 3256.]

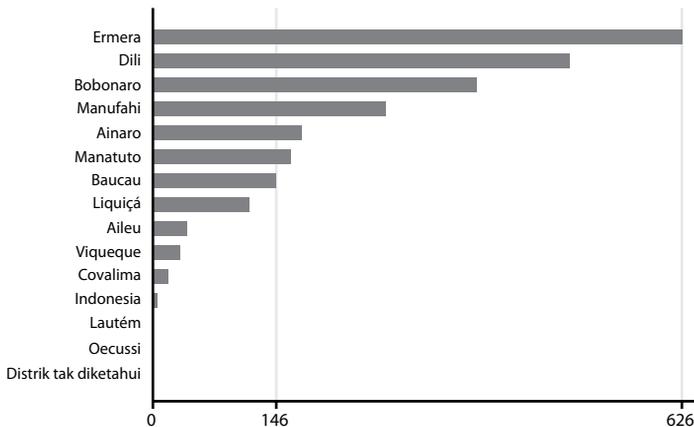
Gerakan bersenjata UDT berakhir pada 20 Agustus 1975 ketika Fretilin melancarkan reaksi bersenjata yang menyeluruh.

52. Para tahanan dibebaskan setelah Fretilin memegang kendali atas wilayah tersebut pada September 1975. Dengan demikian, masa penahanan tak lebih daripada satu bulan; dalam kebanyakan kasus penahanan hanya berlangsung kurang daripada dua minggu.¹⁸ Walaupun gerakan bersenjata UDT dipimpin dari Dili, koordinasinya di setiap distrik dilakukan oleh para pemimpin tingkat distrik. Secara keseluruhan, pola statistik dan alasan penahanan oleh UDT, serta perlakuan terhadap para tahanan di tempat-tempat penahanan di tujuh distrik di Timor-Leste, adalah sebagai berikut.

Pola statistik

53. Penelitian Komisi telah menemukan bahwa tingkat kekerasan terkait gerakan bersenjata UDT beragam antara distrik yang satu dan lainnya. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah laporan penahanan sewenang-wenang oleh UDT di setiap distrik.¹⁹ Jelas terlihat bahwa kekerasan terkonsentrasi di Distrik Ermera, kemudian diikuti oleh Dili yang merupakan markas besar UDT, lalu Bobonaro dan Manufahi. Sementara dari Oecussi dilaporkan tidak ada penahanan dan jumlah penahanan di Distrik Lautém, Viqueque, dan Covalima sedikit.

Bagan jumlah penahanan yang dilaporkan, yang dilakukan oleh UDT, berdasarkan distrik, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

* Meskipun jangka waktu dalam grafik adalah antara 1975 -19 79, yaitu pada fase pertama konflik, harus dicatat bahwa sebagian besar kasus ini terjadi pada 1975.

54. Memang ada dugaan dalam masyarakat bahwa gerakan UDT tidak terlalu keras dan bahwa para tahanan diperlakukan dengan baik, khususnya jika dibandingkan dengan cara-cara Fretilin memperlakukan tahananannya. Sebagai contoh, José Ramos-Horta pernah menulis:

Para pemimpin UDT bertindak lebih sensitif dan manusiawi daripada pemimpin Fretilin...tidak ada pemimpin Fretilin yang pernah ditahan oleh UDT menyatakan disiksa oleh UDT. Tidak sama dengan tingkah laku dari sebagian dari kepemimpinan Fretilin.¹⁹

55. Akan tetapi, penelitian Komisi menemukan bahwa banyak tahanan melaporkan telah mengalami siksaan dan penganiayaan, dalam pola geografis yang serupa dengan insiden penahanan.

56. Analisis kualitatif dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam sebagian besar kasus, tindak kekerasan yang dilaporkan telah dialami oleh para tahanan lebih mirip penganiayaan daripada penyiksaan. Pelanggaran yang umum dilakukan adalah memukul, menendang, dan menampar. Para tahanan disekap dalam jangka waktu panjang tanpa makan atau minum dan dengan kondisi sanitasi yang buruk. Mereka juga digunakan sebagai pekerja paksa. Dalam banyak kasus, berbagai tindakan tersebut merupakan perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Berbagai pelanggaran itu kebanyakan dilakukan oleh para pemimpin UDT sendiri. Analisis tentang berbagai kematian dalam penahanan UDT dapat ditemukan di Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.

Korban

57. Hampir semua korban penahanan sewenang-wenang oleh UDT yang dilaporkan kepada Komisi adalah mereka yang memang benar-benar atau dicurigai sebagai pemimpin, anggota, dan simpatisan Fretilin. Memang, 81,1% (673/830) dari penahanan yang dihubungkan dengan UDT dilaporkan kepada Komisi dilakukan terhadap para korban yang diasosiasikan dengan Fretilin. Sebanyak 7,7% (64/830) korban yang dilaporkan adalah masyarakat sipil dan 3,7% (31/830) merupakan “yang lainnya”. Para korban anggota UDT sendiri membentuk 7,6% (64/830) dari seluruh korban. Jumlah total korban mendukung penelitian kualitatif Komisi bahwa UDT menjadikan anggota Fretilin sebagai sasaran ketika UDT melaksanakan Gerakan Bersenjata 11 Agustus.

58. Apodeti tetap mengambil posisi netral selama gerakan UDT dan anggota-anggotanya tidak dijadikan sasaran oleh UDT.²⁰ Hanya 0,2% (2/830) korban penahanan yang dilaporkan dilakukan oleh UDT adalah anggota Apodeti. Ada anggota Fretilin yang dilaporkan bersembunyi di rumah-rumah pendukung Apodeti ketika aksi bersenjata terjadi.²¹ Anggota Fretilin lainnya melarikan diri dari pertikaian ini dan banyak yang mengungsi ke Dili, misalnya di Kantor Departemen Layanan Sosial (Assisténçia).^{*}

* Kantor Departemen Layanan Sosial terletak di Caicoli (Dili). Bangunan ini sekarang digunakan oleh Universitas Nasional Timor-Leste (UNTL).

59. Paulo Freitas, presiden Partai Trabalhista pada waktu itu, mengatakan bahwa partainya telah secara lisan “bekerjasama dengan gerakan antikomunis UDT” tetapi tidak bergabung ketika UDT melancarkan gerakan bersenjata. Meskipun demikian, ia dikenai tahanan rumah oleh UDT di Ossu (Viqueque) selama gerakan ini berlangsung:

UDT melakukan kudeta dan memenjarakan saya... Kesalahan saya apa kepada mereka sampai mereka datang dan memenjarakan saya? Mereka membawa saya serta liurai [kepala desa] kami, yaitu Gaspar... memegang pistol dan mengancam kami berdua: “Kalian berdua, mulai saat ini kalian harus pergi jauh, kalian berdua tidak diperbolehkan dekat dengan penduduk, sekarang saya yang mengontrol penduduk... Kalian berdua pulang dan diam. Kalian harus menerima ini sebagai penjara.” Jadi, kami berdua bingung dan tinggal di rumah, kami tidak bisa keluar.”²²

Penangkapan sewenang-wenang

60. Komisi mendengar kesaksian bahwa perintah untuk penahanan anggota Fretilin di berbagai distrik datang dari pemimpin UDT di Dili. Francisco Xavier do Amaral, presiden pertama Fretilin, menjelaskan bagaimana ia mendengar UDT memberi perintah melalui radio:

Radio Dili mengirim UDT untuk menyerang Bucoli. Mereka berkata: “Tangkap Fretilin! Pergi dan tangkap mereka di Cairui, pergi dan tangkap kaum komunis.” Saya berpikir, “Kaum komunis apa? Jangan bilang bahwa Fretilin semuanya komunis.” Mereka bilang bahwa Fretilin semuanya komunis...Saya mendengarkan radio sepanjang waktu; saya tak pernah lepas mendengarkannya. Saya dengar bahwa mereka telah menyerang di Aileu, menyerang di Ermera, menyerang di Letefoho, dan mereka yang dari Atsabe (Ermera) datang dan menyerang Komite Sentral di Aileu. Dari Turisca [Manufahi], Funar, Fatumakerek, Laclubar [Viqueque], Soibada [Manatuto], Barique, mereka semua berkumpul dan membentuk perang suci. Mereka berkata: “Perang ini adalah perang suci, perang melawan komunisme. Perang ini diberkati para pastor. Para pastor berdoa bersama mereka dalam misa besar dan memberikan berkat mereka.”²³

61. João Carrascalão, pemimpin militer pihak UDT pada saat gerakan bersenjata, membantah bahwa kepemimpinan UDT di Dili memerintahkan penangkapan. Ia menyatakan kepada Komisi:

Tidak ada perintah untuk menangkap anggota Fretilin dan membawa mereka ke penjara. Tiba-tiba kami terkejut melihat penjara penuh. Tidak ada perintah Komite Sentral. Tindakan dilakukan secara spontan... dan banyak orang bertindak dengan alasan pribadi, yang berasal dari

tahun-tahun sebelumnya, dan mereka mengambil kesempatan dan menangkapi orang-orang begitu saja secara membabi buta...Setiap hari saya pergi ke penjara UDT dan membebaskan 50 hingga 60 orang.²⁴

62. Bukti menunjukkan bahwa pemimpin setempat di tingkat distrik dan subdistrik mengidentifikasi anggota Fretilin dan pendukungnya di daerah tersebut dan melakukan penangkapan sendiri atau mengutus anggota UDT lain untuk melakukan penangkapan. Para korban ditangkap di manapun mereka ditemukan. Dalam beberapa kasus, penangkapan dilakukan di rumah, di jalan-jalan, atau di tempat kerja. Dua perawat ditangkap saat sedang bertugas dan masih mengenakan seragam mereka sesampainya di pusat penahanan.*

63. Yang lainnya ditangkap ketika mencoba lari dari desa untuk menghindari pendukung bersenjata UDT yang membakar rumah-rumah serta menjarah harta-benda mereka. Misalnya, UDT menangkap tokoh Fretilin Vicente Reis (Sahe); saudara lelakinya, Marito Reis; dan 11 orang pendukung Fretilin lain di Laleia (Manatuto) setelah mereka melarikan diri dari serangan UDT di Desa Bucóli (Baucau). Marito Reis menceritakan bagaimana para pendukung UDT meneriaki mereka ketika mereka berhenti di Manatuto.

Mereka mengerumuni mobil kami dan meneriaki kami dengan hal-hal seperti: "Bunuh para simpatisan komunis!"... "Orang seperti kamu Vicente Reis! Apa kamu bisa memerintah di Timor?" Kami hanya diam sebab pada situasi semacam itu kami tidak dapat berbicara.²⁵

64. Yang lain ditangkap ketika ditemukan memiliki kartu anggota Fretilin. João Lopes dari Desa Memo (Maliana, Bobonaro) menuturkan kepada Komisi bahwa tokoh UDT menangkapnya di Desa Asumali karena ia ditemukan membawa kartu anggota Fretilin, kemudian ia diikat, dipukuli, dan ditahan.²⁶ Dalam kasus lain dari Subdistrik Maliana, António da Costa Guterres menuturkan kepada Komisi bahwa ia ditangkap pada 2 September 1975 di Desa Odomau (Maliana) bersama seseorang bernama Carlos, karena membawa kartu anggota Fretilin. Yang menangkapnya adalah pemimpin UDT dari Bobonaro, T1, dan orang-orang kepercayaannya T2, T3, dan T4. Antonio dan Carlos diikat, dipukuli, dan diancam dengan kematian.²⁷

65. Komisi juga mendengar adanya kasus di mana korban ditahan saat terperangkap dalam kekacauan dan kekerasan massal yang terjadi ketika itu, bukan karena afiliasi partai mereka. Misalnya, Lucio Dinis Marques menjelaskan ihwal penangkapannya dengan delapan orang kawannya:

* Enfermeiro José Espírito Santo ditangkap di Rumah Sakit Lahane di Dili. Agostinho Freitas mengatakan bahwa Guido Valadares dan José Espírito Santo masih menggunakan seragam rumah sakit pada saat mereka ditangkap dan ditahan di Palapaço. (Wawancara CAVR dengan Maria José Fatima Ximenes, mendiang istri Enfermeiro José Espírito Santo, Kota Baucau, 2003; Agostinho Freitas, Desa Carabau, Bobonaro, 12 Juni 2003.)

Pada 11 Agustus, kami tinggal di Rosa Lay [suatu toko di Bairro dos Grillhos, Dili Timur]. Saya berusia 19 tahun waktu itu dan bekerja di Diones Dili. Saya dan adik-adik saya...menyaksikan orang-orang UDT berbaris dengan bersenjatanya. Kemudian orang-orang itu menembak secara sporadis ke arah kami. Kami lari masuk rumah. Tidak ada yang berani keluar karena suara tembakan terjadi di mana-mana di kota Dili. Kira-kira jam 3 sore, orang-orang UDT yang sama itu datang lagi dengan mobil, bersenjata Mauser dan G3. Mereka menyergap rumah kami dan menyuruh kami ke jalan raya. Mereka membawa kami sembilan orang kemudian kami diangkut dengan mobil pick-up menuju Palapaço [lokasi markas besar polisi militer Portugis]. Banyak orang yang telah ditahan di sana. Kami tidak tahu saat itu apakah kami juga menjadi tahanan tapi kami disuruh bergabung dengan para tahanan di Caserna [barak]. Selama ditahan, kami tidak dipukul.²⁸

Pusat penahanan dan kasus pelanggaran HAM

Pusat penahanan

66. UDT mendirikan pusat penahanan di berbagai distrik di Timor-Leste. Pada umumnya, fasilitas ini hanya bersifat sementara, guna memenuhi kebutuhan mendesak untuk menahan orang dalam jumlah besar. Komisi mendengar tentang sekolah-sekolah, markas militer, gudang, dan bangunan besar lainnya yang digunakan sebagai pusat penahanan oleh UDT.

67. Di sebagian besar distrik, terdapat satu atau dua pusat penahanan, kemudian lokasi-lokasi yang lebih kecil di distrik digunakan seperlunya. Pusat-pusat penahanan utama di setiap distrik adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Pusat-pusat penahanan utama di setiap distrik

| Distrik | Pusat penahanan utama |
|-------------------|--|
| Dili | Palapaço, barak polisi militer Portugis |
| Ermera | Penjara Ermera Aifu, sebuah gudang kopi |
| Manufahi | Bekas penjara Portugis di Same Gubuk seperti "kandang ayam" di Wedauberek, Alas |
| Liquiçá | Sekolah Dasar Liquiçá Sekolah Dasar Maubara |
| Maliana, Bobonaro | Corluli, gudang beras |
| Lautém | Barak militer di Companhia dos Caçadores 14 (Kompi Senapan ke-14) |
| Baucau | Pousada Baucau, bekas hotel Descascadeira, penggilingan padi di Bahu, Baucau |

68. Banyak tahanan mengatakan kepada Komisi tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat selama mereka menjalani penahanan oleh UDT, termasuk penyiksaan dan penganiayaan. Banyak juga yang bersaksi ditahan dalam kondisi sangat buruk, hanya dengan makanan dan air yang sangat terbatas.

Dili

69. Pada pagi 11 Agustus, UDT merebut lokasi-lokasi kunci di sekitar Dili, termasuk markas Polisi Militer Portugis yang disebut *Caserna* Palapaço. Selain menyediakan kepada tentara UDT pasokan senjata dalam jumlah besar, tempat ini menjadi markas UDT dan pusat penahanan utama UDT di Dili.²⁹ Selain mendengar dari tahanan dari Dili, Komisi juga mendengar orang-orang yang ditangkapi di Distrik Manatuto dan Baucau yang dibawa dan ditahan di Palapaço.^{*} Tokoh Fretilin, seperti Vicente Reis, Guido Valadares, dan José Siqueira ditahan di Palapaço. Tahanan lainnya adalah anggota Fretilin, simpatisan, dan warga sipil yang diduga mendukung Fretilin.

70. Mario Carrascalão menceritakan ketika ia mengunjungi Palapaço sekitar 14 Agustus 1975, setelah sebelumnya berada di pelosok-pelosok di Timor-Leste:

Di Palapaço saya melihat orang tua, anak-anak, dan pemuda...anak-anak umur 12-an tahun menentang senjata. Saya melihat anak laki-laki teman saya, berusia 12 atau 13 tahun, sedang membawa sepucuk G-3.³⁰

71. Dari kesaksian dan wawancara korban, Komisi mendengar bahwa jumlah anggota Fretilin yang ditahan oleh UDT di Palapaço diperkirakan antara 100 hingga 200 orang.[†] Ruang tempat orang-orang ditahan begitu penuh sesak sehingga penjaga harus berdiri di luar.³¹ Penjaga wanita membawa makanan dan memberi makan para tahanan dengan menggunakan sendok plastik. Setiap tahanan berhak mendapat jatah satu sendok bubur yang diberikan dua kali sehari.³² Petugas menggunakan sendok yang sama untuk semua tahanan.³³

72. Para saksi menceritakan kepada Komisi bahwa para tahanan di Palapaço mengalami penganiayaan di tangan anggota dan penjaga UDT. Di pintu penjara, penjaga memukuli tahanan yang akan pergi ke jamban sehingga banyak tahanan yang memilih buang air kecil di dalam sel mereka. Beberapa tahanan dilaporkan ditembak mati oleh para penjaga penjara, satu orang secara tidak sengaja.[‡] Sebagian tahanan juga mengalami penyiksaan, seperti yang dijelaskan oleh pernyataan Luis de Jesus Guterres kepada Komisi berikut ini:

^{*} Vicente Reis dan beberapa anggota Fretilin lainnya dari Bucoli (Baucau) ditangkap dan dibawa ke Palapaço di Dili untuk ditahan. Domingos Gusmão, seorang anggota Fretilin, ditangkap oleh tentara UDT di Gariuai (Baucau) dan juga dibawa ke Dili untuk ditahan di Palapaço. (Wawancara CAVR dengan Agostinho Boavida Ximenes [Sera Malik], Soe, Timor Barat [Indonesia], 28 Agustus 2004.)

[†] Menurut Vicente Araújo, ada sekitar 200 anggota Fretilin yang ditahan di Palapaço.

[‡] Marito Reis mengatakan kepada Komisi bahwa seorang penjaga secara tidak sengaja membunuh José Espirito Santo di Palapaço ketika senapannya meletus tanpa sengaja, dan bahwa José Sequeira ditembak oleh seorang penjaga ketika ia sakit lalu berteriak. (Wawancara CAVR dengan Marito Nicolau dos Reis, Dili, 27 Juli 2003.)

Pada tanggal 11 Agustus di Ailok Laran, Dili, saya bersama anak dan istri saya serta beberapa tetangga [kami semua berjumlah 12 orang] dibawa paksa oleh sepuluh orang dari partai UDT yang tak kukenal. Mereka membuat kami berjalan ke penjara di Palapaço. Ketika kami tiba, kami dipisahkan dari anak-anak dan istri kami; mereka dibawa ke Liquiçá dan para lelaki ditahan secara bersama di Palapaço. Kami (para lelaki) diinterogasi oleh dua orang anggota UDT, [T5] dan [T6]. Kemudian mereka memukul kami dengan ikat pinggang kulit hingga berdarah di mana-mana dan disiksa selama dua hari...Kami diharuskan memasak untuk para tahanan lainnya selama delapan hari. Setelah itu kami dibebaskan oleh para pemimpin UDT di Palapaço, João Carrascalão dan Manuel Carrascalão. Kemudian kami pergi ke Liquiçá untuk mencari keluarga kami.³⁴

73. Anggota CCF juga mengalami penganiayaan di tempat penahanan. Vicente Reis (Sahe) menderita pemukulan dan pencacimakian setelah ia dibawa ke penjara dan diinterogasi oleh seorang anggota UDT, T7.* Saudara lelaki Vicente Reis, Marito Nicolau dos Reis, memberikan kesaksian tentang penahanan mereka di Palapaço.

Pertama kami masuk...lalu [T7] memanggil Sahe. "Kamu yang membawa komunis dari Portugal, ke sini!" Dia menampar, menendang, dan meninju muka Sahe. Dia [Sahe] langsung roboh dan berlutut dan kedua tangannya sampai ke tanah, [T7] meraih bayonet yang ada di laras senjata Mauser dan hendak menusuk Sahe, tapi seorang anggota polisi yang telah bekerjasama dengan UDT [T8], dengan cepat menangkis bayonet yang diarahkan ke Sahe sambil berkata dalam bahasa Portugis: "Não faz isso [jangan bertindak demikian]." Ketika pemukulan telah berakhir, Sahe diminta duduk. Saya masih mengingat, ketika mereka memukul dan menendang, mungkin hanya kami berdua saja. Setelah itu, kami disuruh duduk dekat pintu penjara, lalu mereka mengatakan, "Kalian Unetim,[†] kalian yang komunis di Baucau itu."³⁵

74. Xanana Gusmão, yang ditangkap dan ditahan oleh UDT di Palapaço, juga masih ingat tentang penahanan dan penyiksaan terhadap Vicente Reis (Sahe):

Mereka meneriakkan "Komunis!" pada saat mereka memukul dan menendang tubuh Sahe [Vicente Reis] hingga sempoyongan. Namun ia tidak pernah mengeluh. Seorang penjaga UDT mengatakan pada kami bahwa kami berada di tahanan karena kami semua komunis. Sahe bertanya kepadanya, apakah dia tahu komunisme itu apa? "Komunisme, ya, ah, aku tidak pasti," katanya dan pergi.³⁶

* T7 adalah anggota UDT. Ia dibunuh oleh anggota Fretilin T9 dan T69 di Holarua (Same, Manufahi) pada 28 Januari 1976, sehari setelah ia melarikan diri dari pembantaian kelompok José Osorio di Hat Nipah, Desa Holarua (Same, Manufahi). (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.)

† União Estudante de Timor (Unetim) adalah organisasi mahasiswa yang berafiliasi kepada Fretilin.

75. Komisi juga menerima kesaksian yang mengatakan bahwa sebagian tahanan dianiaya secara fisik sebelum mereka tiba di Palapaço.

Manuel Agostinho Freitas, tahanan di Palapaço

Manuel Freitas adalah utusan Fretilin dari Desa Lepo di Zumalai, Distrik Covalima. UDT menangkapnya di Mota Maloa, Dili, pada 11 Agustus 1975. Ia menceritakan ihwal penangkapannya di Palapaço:

Pada hari Senin pagi, tanggal 11 Agustus 1975, UDT menangkap saya di Mota Maloa, Dili. Kami berempat ditangkap dan dibawa ke Aitarak Laran (Dili) dengan menggunakan sebuah jeep. Di jembatan, pendukung UDT memukuli kami dengan kayu. Kemudian mereka berkata: "Bawa mereka ke pelabuhan dan lemparkan mereka ke laut."

Tetapi, mereka memutuskan tidak membawa kami ke pelabuhan. Justru mereka membawa kami ke Mandarin. Di sana, saya melihat orang-orang berbaris di jalan. Mereka menghentikan mobil kami. Mereka mulai memukuli kami... Kemudian mereka membawa kami ke Palapaço. Ketika kami turun dari kendaraan, para pendukung UDT memukuli kami dan melempari kami dengan batu. Kami ditempatkan di markas militer pada jam 6 pagi. Di sana saya melihat perawat seperti Guido [Valadares] dan José Espirito Santo dari Baucau yang masih mengenakan seragam rumah sakit mereka.*

Pada tanggal 14 Agustus, saya mencoba berbicara dengan pimpinan UDT, T10, dan saya katakan: "Mengapa Anda tidak menangkap para pimpinan kami saja, mengapa kami orang-orang kecil [yang ditangkap]?" Kami meminta apakah ia dapat membantu membebaskan kami. Ia menolak dan mengatakan bahwa ia tidak akan bisa tidur sampai UDT berhasil menangkap Francisco do Amaral dan Nicolau Lobato. Jadi kami merasa bahwa kami pasti mati. Mereka menggeret kami kembali ke sel. Pada malam 15 Agustus, Senhor Arthur datang. Saya tidak mengenalnya, saya hanya pernah mendengar orang lain memanggilnya Senhor Arthur. Ia masuk sel kami dan mau membebaskan kami malam itu...tapi perawat José Espirito Santo mengangkat tangan dan memberikan saran kepadanya agar kami tidak dibiarkan pergi malam hari. Ia takut kalau anggota UDT yang lain akan mengira bahwa kami meloloskan diri. Ia menyarankan agar kami dilepaskan pagi hari. Pagi berikutnya pada jam 7, kepala polisi, T11, memasuki penjara

* Mandarin adalah wilayah di Dili di dekat Farol dan Palapaço.

dan berteriak dengan geram: “Tunggu ajalmu. Kamu orang komunis, tidak boleh lolos.” Kami diikat dan diinjak-injak.

Pada tanggal 17 Agustus, seorang Malae,* T12, dan perwira polisi T13, keluarga Lucio Marques yang ditahan bersama kami di dalam sel, datang. Dengan membawa senjata Mauser di tangannya, ia berdiri di pintu penjara dan mengatakan, “Angkat tangan jika kalian mempunyai hubungan keluarga dengan Albano.” Saya mencubit agar memasukkan saya juga. Kami mengangkat tangan dan membuat tanda ‘V’† lalu kami dibebaskan.³⁷

76. Laporan yang diperoleh Komisi menunjukkan bahwa walaupun kekerasan politik banyak terjadi pada awal gerakan bersenjata UDT. UDT terus menangkap orang-orang sampai Fretilin melancarkan reaksi bersenjatanya di Dili pada 20 Agustus 1975. Laporan-laporan berikut yang diperoleh Komisi menguraikan tentang penangkapan dan penahanan pendukung Fretilin di Dili:

Tabel 3: Penangkapan dan penahanan pendukung Fretilin di Dili

| Pemberi kesaksian | Tanggal dan tempat penangkapan | Penahanan | Penyiksaan |
|--------------------------------------|---|--|--|
| Matias de Jesus Soares ³⁸ | 11 Agustus 1975 ditangkap oleh 10 anggota UDT. | Ditahan selama enam hari di Palapaço | Tidak disebutkan oleh deponen. Pada 16 Agustus, Matias dan Felix Fatima, pengemudi UDT, melarikan diri dari Palapaço dengan menggunakan mobil. T7, seorang anggota UDT, menembaki mereka tapi tidak kena. |
| Vicente de Araújo ³⁹ | 11 Agustus di Camea (Dili) | Dibawa ke Palapaço. | Ketika ia tiba di pintu penjara, ia dipukul punggungnya dengan popor senapan, ditampar, dan ditendang. |
| Domingos Carvalho ⁴⁰ | 11 Agustus ditangkap oleh anggota UDT di Becora (Dili). | Dimasukkan ke mobil dengan delapan orang lainnya dan dibawa ke Palapaço | Ditampar dua kali ketika ditangkap. Dipukuli selama tiga hari di tempat penahanan dan dijaga ketat oleh anggota UDT dari Ermera yang bersenjatakan pedang, pisau, dan panah. |
| Alexandrino da Silva ⁴¹ | 11 Agustus, anggota UDT T14 dan T15 menyerang rumah pemberi kesaksian di lapangan udara Bairro Pite, Dili Barat, dan menangkap pemberi saksi. | Deponen diikat dengan korban yang lain, Soriano dan José. Mereka dibawa dengan jeep ke Palapaço. | João Carrascalão berdiri di pintu; ikatan mereka dibuka, dan mereka ditahan dengan Guido Valadores, José Alexandre Gusmão (Xanana Gusmão), Cornelio, Pantelião, José Siqueira, José Espirito Santo, Domingos Conceição, Alberto da Costa, dan Manuel Freitas. Mereka diberi makanan kotor satu kali sehari; tahanan yang lain dari Ermera dan Maubisse (Ainaro) yang pergi ke jamban dipukuli. |

* Sebuah istilah yang digunakan di Timor-Leste untuk mendeskripsikan seorang dari luar atau orang asing, dalam hal ini seorang Portugis.

† Jari-jari mereka membentuk simbol V, lambang UDT.

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Moises Soares Pereira ⁴² | 18 Agustus, oleh tentara UDT di Audian, Dili. | Diikat dan dibawa ke Palapaço dengan mobil. | Dimasukkan ke sel yang telah dihuni sekitar 250 orang. Ketika berada di tahanan, ia dipaksa membersihkan sel. |
| Manuel do Rêgo ⁴³ | 18 Agustus, deponen dihentikan oleh anggota UDT yang bersenjata yang meminta ia menunjukkan kartu pengenalan UDT, tetapi ia tidak memilikinya. | Segera setelah itu, sebuah <i>jeep</i> muncul dan membawa deponen ke Palapaço. | Setelah tiba, anggota UDT, T7 dan T16, memukuli deponen, Mario Sousa, Acacio Carvalho, dan Moises, dengan senjata G3 hingga senjata tersebut patah. Deponen diperintahkan memperbaiki pipa air dan korban lainnya diminta membersihkan jamban. |

Ermera

77. Ermera merupakan basis kuat UDT dan Komisi menerima laporan terbanyak mengenai penahanan sewenang-wenang oleh UDT di Distrik Ermera; jumlahnya mencapai 626.* Ermera adalah daerah penghasil kopi dan seorang pemilik perkebunan di Aifu, Ermera, yang bernama T17, merupakan ketua Komite Regional UDT di Ermera.⁴⁴ Namanya disebut dalam laporan kepada Komisi sebagai orang yang terlibat langsung dalam berbagai kasus penangkapan dan penahanan di Distrik Ermera.[†]

78. UDT membuat dua pusat penahanan utama di Distrik Ermera, yakni di Aifu dan penjara Ermera. Beberapa pusat penahanan yang lebih kecil didirikan di seluruh distrik. Begitu tindakan bersenjata Fretilin mulai dilancarkan, UDT memindahkan semua tahanan di Aifu ke penjara Ermera. UDT memasukkan secara paksa sekitar 70-75 tahanan Fretilin ke dalam satu sel kecil dengan ventilasi yang tidak memadai, sehingga para tahanan kesulitan bernapas. Kondisi di penjara ini sangat buruk. Tahanan kesulitan mendapatkan makanan. Tidak ada jamban di dalam sel; petugas hanya menyediakan drum untuk digunakan para tahanan buang air. Pada 1 September 1975, petugas UDT mulai mengeluarkan para tahanan. Sebagian dieksekusi dan sebagian lagi dibebaskan.⁴⁵ (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.)

79. Dua perempuan dari Ermera menceritakan mengenai penahanan dan penyiksaan di penjara Aifu dan Ermera. Eufrasia de Jesus Soares dari Poetete (Ermera, Ermera) adalah istri Daniel Carvalho, Sekretaris Regional Apodeti untuk Distrik Ermera. Ia menuturkan kepada Komisi:

Setelah kudeta mereka, UDT mulai menjadi keji di berbagai wilayah, dari Ermera hingga Railaco...Saya mengikuti semua perkembangan di Ermera...Pada awalnya mereka tidak membunuh, mereka hanya memukuli, menangkap, dan terlibat berbagai aktivitas tidak manusiawi,

* Perhatikan bahwa angka ini tidak menunjukkan 626 peristiwa penahanan secara terpisah, sebab beberapa deponen mungkin telah menjelaskan insiden yang sama.

† Pernyataan HRVD: 1061; 4540; 6156; 8341; 6203; 8304; dan 6421.

sehingga banyak yang mencari perlindungan dari kami. Pada waktu itu kami tinggal di Railaco. Namun tindak kekerasan terjadi di banyak tempat. Orang-orang ditangkap, dipukuli, dan dibunuh di Aifu.⁴⁶

80. Maria Cecelia de Jesus menceritakan kepada Komisi bahwa tentara UDT menangkap suaminya, Virgilio Agustino Exposto Monteiro, dan temannya Luis da Costa di persimpangan Humboe (Subdistrik Ermera, Ermera) pada 11 Agustus. Penangkapan tersebut diperintahkan oleh para pemimpin UDT, T18 dan T19. Kedua korban ditahan di penjara Ermera selama dua hari dan pada 13 Agustus António Casimiro membebaskan mereka. Tapi, pada 20 Agustus, Virgilio ditangkap kembali di Humboe oleh UDT bersama ayah Cecilia dan ditahan di penjara Ermera. Karena Cecilia belum resmi menikah dengan Virgilio, ia pergi mengikuti Pastor José Maria Barbosa ke penjara Ermera dan menikahi Virgilio. Pastor Barbosa diancam dan dikeluarkan dari penjara Ermera oleh T18. Ia mengatakan bahwa ia melihat 72 orang yang ditahan di penjara Ermera.⁴⁷

81. Adelino Soares menceritakan penangkapannya di Sakoko (Ermera) dan penahanannya di Aifu:

*Pada tanggal 11 Agustus, pendukung UDT yang bersenjata mulai berdatangan ke Sakoko, Ermera. Tempat pertama yang mereka datangi adalah Sakoko karena dianggap sebagai basis Fretilin. Pasukan datang dengan seorang mayor dan dengan senjata-senjata seperti Mauser dan G3. Penduduk desa mulai panik ketika para pendukung bersenjata mulai menembak secara membabibuta. Orang berlarian ke segala arah. Para pendukung menangkap kami 10 orang yang tidak dapat meloloskan diri, dan membawa kami ke Aifu. T20, seorang komandan UDT, dan T17, sedang menunggu kami.**

[T20] bertanya, "Apakah kamu yang menjabat delegasi [Fretilin] di Sakoko?" Saya jawab, "Ya, saya orangnya." Walaupun saya hanya sebagai anggota biasa. Lalu dia [T130] berkata, "Sekarang kalian boleh kembali ke rumah, tetapi besok kalian harus kembali ke sini dengan tombak, panah, parang, dan senjata tajam lainnya yang dapat kamu temukan." Tepat jam 6 pagi, kami kembali ke Aifu [dan] mereka mengambil persenjataan yang kami bawa. Mereka berkata, "Sekarang, pergi mencari kawan-kawan Fretilin kalian!" Kami mematuhi mereka dan pergi mencari kawan-kawan kami. Namun, pada saat kami kembali tepat jam 10 pagi, mereka mengikat tangan dan kaki kami. Kami dibiarkan terikat selama seminggu. Mereka memukul para tahanan yang lain tetapi tidak memukul orang dari Sakoko...

* T17 adalah seorang pemimpin UDT juga pemilik perkebunan kopi di Aifu. Ia memiliki rumah di Aifu. Pada 1 September 1975, para penjaga tahanan UDT membawa tahanan dari penjara Ermera ke rumahnya dan mengeksekusi mereka. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.)

Mereka melaparkan kami selama seminggu. Mereka mengikat tangan dan kaki kami dari pagi hingga malam. Banyak kawan yang menangi disebabkan oleh penderitaan yang tidak tertahankan. Beberapa meninggal karena kelaparan.⁴⁸

82. Kakak Adriano Ximenes adalah salah seorang yang ditahan di Aifu. Adriano melaporkan bahwa seorang komandan UDT, T21, pergi ke Lekesi di Desa Poetete (Ermera, Ermera) dan mengancam akan menembak kakak Adriano, Alexandrino Mau Soko. Karena Alexandrino berlutut di kaki T21, ia tidak ditembak tetapi dipenjarakan di Aifu. Ketika mereka tiba, Alexandrino dibacok di punggungnya dengan parang lalu dipaksa membersihkan dan memasak untuk anggota UDT.⁴⁹

Manuel Duarte, dipenjarakan di Aifu

Manuel Duarte berhasil melarikan diri dari sebuah kelompok yang anggotanya akhirnya dibunuh oleh UDT pada awal September. Ia memberi gambaran mengenai penahanannya oleh UDT di Ermera dan di Aifu pada Audiensi Publik CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, yang diadakan di Dili pada 15-18 Desember 2003:

Pada tanggal 9 Agustus saya tiba di Dili dari rumah saya di Ermera. Pada tanggal 11 Agustus saya berada di rumah Zeca Bras ketika T22 dari UDT menangkap saya dan membawa saya ke Uma Kleuk. Di Uma Kleuk mereka mengganti kartu Fretilin saya dengan kartu UDT kemudian barulah saya dibebaskan.

Hari berikutnya pada tanggal 12 Agustus, T22 dengan empat orang lain kembali menangkap saya dan membawa saya ke Aifu yang merupakan tempat yang penuh tahanan. Mereka mengikat tangan kami dan memaksa kami berbaring di tanah seperti babi. Kami ditahan di sana selama lebih dari dua minggu. Pada tanggal 20 Agustus sebagai respons atas kudeta tandingan di Dili, UDT melarikan diri ke Ermera. T18 memindahkan kami dari penjara di Aifu ke penjara di Ermera. Kami disekap di sana selama lima hari. Jambannya hanyalah berupa drum di bagian tengah sel.

Pada tanggal 1 September, T69 memerintahkan pendukung UDT yang bersenjata untuk membawa Lorenço dos Santos, Armando Barros, Miguel Salsina, Vicente, dan saya sendiri ke Aifu untuk dibunuh. Sebelum kami tiba di Aifu, kami berjumpa dengan pasukan UDT dan seorang komandan yang datang dari arah Aifu dan kami diperintahkan untuk pergi ke Claetremam [sebuah tempat di dusun Duhoho, Desa Catrai-Leten (Letefoho, Ermera)]. Di sana, mereka mengambil arloji dan uang kami dan kami menyangka bahwa kami akan dibunuh. Di sana kami berjumpa dengan kelompok tahanan kedua tetapi kami tidak berbicara satu sama lain, kami hanya berdoa.⁵⁰

83. Tahanan yang berafiliasi dengan Fretilin juga disekap di berbagai lokasi penahanan kecil di seluruh Ermera. Komisi mendengar kesaksian mengenai tahanan UDT yang ditahan di Subdistrik Hatolia di Nunsloet, Lemia Sorin Balu, Boatu, Koliata (semua di Subdistrik Hatolia, Ermera) Leotela;⁵¹ di Subdistrik Letefoho;⁵² di Sekolah Dasar Lihu dan lokasi lain di Subdistrik Railaco;⁵³ sebuah rumah pribadi di Desa Poetete dan sebuah penjara yang telah diperbaiki di Desa Maudiu di Subdistrik Ermera.⁵⁴ Para tahanan di lokasi-lokasi penahanan kecil ini juga mengalami penyiksaan dan penganiayaan. Kasus berikut terjadi saat Gerakan Bersenjata 11 Agustus 1975:

- Dinis da Costa Pereira dari Gomhei, di Desa Riheu (Ermera, Ermera), mengatakan kepada Komisi bahwa pada 11 Agustus 1975, ia ditangkap di rumahnya oleh 12 orang pendukung UDT bersenjata yang dipimpin oleh T25 dan itu dilakukan atas perintah T18 dan T19. Mereka membawa Dinis Pereira ke sebuah penjara yang baru disediakan di Desa Maudiu di mana ia melihat lima orang lainnya yang telah ditahan pada hari itu, yaitu Nicolau, Mau-Hatu, Viegas, Mau-Usi, dan Francisco. Para tahanan ditelanjangi, dihajar babak-belur, ditendang, dan dipukuli. Mereka tidak diberi makanan ataupun minum selama berada dalam tahanan. Pada 20 Agustus, ketika Fretilin melancarkan reaksi bersenjatanya, mereka melarikan diri.⁵⁵
- Juga pada 11 Agustus, seorang perwakilan UDT setempat, T26, meminta kepala Desa Nukurai, yaitu T27, dan T28, untuk menangkap lima anggota Fretilin. Korban ditangkap di Desa Haufu (Letefoho, Ermera) dan dibawa ke Companhia (markas kompi - pusat militer Portugis) di Dinhati (Letefoho). Saat berada dalam penahanan, mereka disiksa dan dikenakan tindakan tidak berkemanusiaan.⁵⁶
- Luciano Salsinha Ximenes menjelaskan bagaimana di Desa Railaco Kraik (Railaco) pada 11 Agustus, pasukan UDT, termasuk anggota UDT T29 dan T30, menangkapnya. Mereka mengikat tangannya, menghajarnya dengan batang besi dan kayu hingga darah bercucuran dari sekujur tubuhnya, kemudian membawanya ke Kota Railaco kepada pemimpin UDT di daerah itu, T31. Di sana, ia ditempatkan di dalam sel dengan empat orang lainnya termasuk liurai Napoleão dari Taraso (Railaco, Ermera), Mau Tero dan Mau Lere dari Lihu, dan José Tilman dari Aileu.⁵⁷ Pada 13 Agustus mereka dipukul kembali dan kemudian dibawa ke Aifu (Ermera).
- Abel de Oliveira Pinto menuturkan kepada Komisi bahwa pemimpin UDT T17 menangkapnya pada 11 Agustus di Eratoi (Letefoho, Ermera), karena ia pendukung Fretilin. T17 mengikat tangan Abel Pinto kemudian menghajarnya, sebelum ia dibawa ke Letefoho tempat ia ditahan bersama 25 orang tahanan asal Fretilin lainnya. Pendukung UDT juga membakar rumahnya. Ia menjelaskan bagaimana pada 20 Agustus, pemimpin UDT, termasuk T18, T19, T32, dan T33 datang di Letefoho untuk melihat para tahanan. Mereka mengancam akan membunuh Abel Pinto, tetapi urung dan hanya menyayatnya dengan pisau.⁵⁸

84. Penahanan masih berlanjut pada 12 Agustus: Paulino de Deus Araújo mengutarakan bagaimana pada 12 Agustus 1975 di Lauana (Letefoho, Ermera) anggota UDT memaksanya bergabung dengan UDT. Hari yang sama ia ditangkap dan dibawa ke Letefoho. Hari berikutnya, ia dan tahanan lainnya yang bernama Victor diikat dan dipukuli oleh tiga pendukung UDT yang bernama T34, T19, dan T32.⁵⁹

85. Serafin de Jesus Martins memberikan kesaksian mengenai penahanannya dan juga penahanan ayahnya pada saat terjadinya gerakan bersenjata UDT. Dalam pernyataannya, ia menuturkan bahwa karena ia pendukung Fretilin yang berusia 16 tahun, anggota UDT, yaitu T35, T36, dan T37, datang ke rumahnya untuk menangkapnya di Manusae (Hatolia, Ermera) pada 12 Agustus. Karena gagal menjumpai Serafin, mereka membawa bapaknya, Besi Leto, dan menahannya di markas UDT Hatolia di Nunsloet di Desa Ailelo (Hatolia, Ermera) selama dua hari.

86. Pada 13 Agustus ketiga anggota UDT itu kembali lagi dan tetap gagal menemukan Serafin, mereka mencari maki ibu dan saudara perempuannya. Pada 15 Agustus, Serafin dan saudaranya, Cipriano Guterres, pergi ke Nunsloet, Aileo (Hatolia, Ermera) untuk berbicara dengan pemimpin UDT mengenai penahanan ayahnya:

Ketika kami tiba, para anggota UDT langsung menahan saya. Mereka memukul tubuhku secara menyeluruh dengan sebuah besi dan sebatang kayu. Beberapa dari mereka memukulku dengan sebuah batu hingga kepalaku terluka, tangan kananku patah, serta lututku berdarah. Seseorang menggunakan sebuah pedang dan memotong kedua pahaku. Lalu mereka membakarku dengan api dan menendang dan memukul sebagian tubuhku. Saat itu, terdapat banyak orang [yang memukulku] namun saya hanya kenal T38, T39, T40, T41, dan T42.⁶⁰

87. Serafin berada dalam satu sel dengan empat orang tahanan asal Fretilin, yang bernama Rui Fernandes, Manuel da Silva, Damião de Oliveira, dan Gaspar de Oliveira, yang kesemuanya ditahan di Urahou (Hatolia, Ermera). Setelah beberapa hari, keempat orang tersebut dibawa keluar lalu dieksekusi. Serafin ditahan selama delapan hari dan kemudian dipindah dari penjara Hatolia, lalu dibebaskan oleh seorang anggota Polisi Keamanan Umum (*Policia Segurança Publica*).

88. Pada 25 Agustus, anggota UDT menangkap Serafin lagi dan membawanya kembali ke Nunsloet. Kali ini ia tidak ditempatkan di sel, tetapi dipaksa tidur di atas kerikil selama empat hari. Seorang kapten *Segundha Linha*,^{*} T43, berencana membunuh Serafin pada saat bendera UDT diturunkan, namun dua orang pendukung UDT lainnya, yaitu Augusto Marcal Lemos dan Hilario Soares, mengetahui rencana tersebut dan memberitahu Serafin agar berhati-hati. Ia kemudian melarikan diri dan bersembunyi sampai tentara Fretilin memasuki Raimerhei (Ermera, Ermera).⁶¹

* *Segundha Linha* adalah tentara lapis kedua atau tentara cadangan Portugis. Mereka lazimnya adalah pasukan adat yang bergabung dengan raja-raja setempat (*liurai*) dan dikooptasi ke dalam struktur militer Portugis serta diberikan jenjang militer Portugis.

Bobonaro

89. Penangkapan oleh UDT di Distrik Bobonaro juga dimulai pada 11 Agustus 1975, terutama di Subdistrik Maliana dan dipimpin oleh komandan UDT, T1 dan T44. Pusat penahanan utama UDT untuk orang-orang dari Subdistrik Maliana adalah gudang beras di Corluli, Desa Ritabou (Maliana, Bobonaro).⁶² Komisi mendengar informasi bahwa ada 70 orang anggota Fretilin yang ditahan di sana, meskipun beberapa orang telah dipindahkan ke sana dari lokasi penahanan yang lain di sekitar Subdistrik Maliana.⁶³ T45 adalah penjaga utamanya dan ia menentang senapan Mauser. Perlakuanannya terhadap tahanan benar-benar kasar. Martino Lopes dan João Godinho menuturkan kepada Komisi bahwa tahanan tidak mendapatkan makanan maupun minuman, dan satu atau dua tahanan mati kelaparan.⁶⁴

90. João Godinho adalah salah seorang dari 70 anggota Fretilin yang ditahan di Corluli. Ia menuturkan kepada Komisi bahwa pada 11 Agustus, para militan UDT menangkap sejumlah pendukung Fretilin di Maliana. Ia ditangkap ketika dalam perjalanan menuju tempat kerjanya dan dibawa ke sekretariat UDT. Pada sore harinya, UDT memindahkan orang-orang yang telah ditangkap ke Kamp Kerja Umum (*Acampamento Obras Publicas*) di Maliana. Di sana, para penjaga UDT memberikan radio kepada para tahanan untuk mendengarkan siaran langsung dari UDT. Mereka mengatakan kepada para tahanan: “Dengarkan baik-baik! Fretilin telah menyerah!” tetapi setelah beberapa hari, penjaga itu mengambil kembali radio tersebut. Pada setiap kesempatan, mereka mengancam untuk “memandikan” para tahanan tetapi para tahanan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh para penjaga itu.* Para tahanan kemudian dipindahkan ke Corluli. João Godinho menuturkan kepada Komisi:

Pada suatu sore, mereka menyuruh kami berdiri berbaris dan melarang kami membawa pakaian dan selimut. Mereka mengatakan: “Naik ke mobil.” Ada yang dilempar saja ke atas truk. Kami tidak tahu mau dibawa ke mana. Sampai di Corluli baru kami tahu bahwa kami di Corluli. Mereka [pasukan UDT] berdiri dalam dua barisan dengan bersenjata tombak, parang, dan panah dan mereka mendorong kami lewat tengah mereka dan masuk ke tempat tahanan. Mulai saat itu kami tidak makan lagi...Kami bertahan saja di sana sampai tanggal 2 September 1975.

Ketika mulai terjadi tembakan, kami mengira UDT yang menembak. Tidak lama kemudian anak perempuan dari salah seorang tahanan bernama Felisberto, berdiri di jendela dan mengatakan: “Ayah, ayah, mari kita menyingkir. Bobonaro sedang menyerang!”...Seorang tahanan, António Valente, sudah tidak berdaya. Sedangkan João sudah mati di sebelah ruangan tahanan lain. Tidak lama kemudian enam orang perempuan, Ernestina Moniz, Florença Maia, Flora de Jesus

* “Memandikan” adalah ungkapan halus untuk “membunuh”. Istilah yang serupa digunakan pada masa pendudukan Indonesia, yaitu “mandi laut”, artinya “dibunuh”.

Moniz, Anita Amaral, Luisa da Gama, dan Leonita datang mencari kami...mereka membuka pintu tahanan...António Valente, kami sempat membawa dia keluar dari tempat tahanan, namun sampai di luar dia sudah tidak berdaya untuk berdiri dan tidur saja. Jadi kami memasukkan dia lagi ke dalam ruangan tahanan dan menutup pintu, kami pun pergi. Kami mendengar informasi, kemudian pasukan yang dari Bobonaro datang menemukan dia dan mengubur dia.⁶⁵

91. José Pinto Guterres, juga salah seorang tahanan di Corluli, berbicara kepada Komisi mengenai pengalamannya. Ia ditangkap bersama para pendukung Fretilin lainnya pada 11 Agustus 1975 atas perintah pemimpin UDT di Maliana, antara lain T3, T47, T48, T49, dan T50 dari Odouma (Maliana, Bobonaro). Mereka dibawa ke Corluli:

Selama dalam perjalanan ke Corluli, di atas truk mereka menendang dan menampar kami. Dalam tahanan mereka memukul kami dan tidak memberikan makanan kepada kami. Makanan dibawa oleh para istri kami, tapi mereka [UDT] mengotorinya dulu baru diberikan kepada kami. Selama sembilan hari di tahanan Corluli, kami tidak dikasih makanan dan minuman. Jika kami meminta minum, mereka mengambil air kotor dan menumpahkannya ke lantai dan kami menjilat saja air yang ada di lantai. Ada beberapa teman yang tidak tahan dengan haus, meminum keringat dan air kencingnya sendiri. Kami berjumlah 70 orang yang ditahan di Corluli.⁶⁶

92. Berbagai pernyataan yang diberikan kepada Komisi mengonfirmasikan adanya perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan di Corluli. Beberapa pernyataan menguraikan bagaimana para petugas membiarkan tahanan kelaparan, menyebabkan meninggalnya dua atau tiga orang tahanan. Selain itu, mereka mengatakan bahwa petugas menghajar tahanan yang berani meminta izin ke jamban.⁶⁷ José Pinto Guterres menjelaskan bagaimana telinga keponakannya, Anus Alesu, dipotong di Corluli oleh seorang anggota UDT.⁶⁸ António da Costa Guterres, yang ditahan di Corluli karena diketahui mempunyai kartu anggota Fretilin (lihat kasus di atas), menuturkan kepada Komisi bahwa ia dan sebagian tahanan dipaksa melarikan diri ke Turiskai (salah satu desa Timor Barat di perbatasan dengan Subdistrik Maliana) dengan UDT pada 12 September. Dari sana ia dibawa UDT ke kamp pengungsi di Atambua, Timor Barat.⁶⁹

93. Penangkapan di Bobonaro berlanjut selama beberapa minggu. Pusat penahanan yang lebih kecil didirikan di Subdistrik Maliana, termasuk di Santa Cruz di Maliana Kota, markas UDT di Desa Ritabou, “bagian” pusat penahanan atau *quartel* Maliana, Maumali, dan rumah *liurai* setempat, Guilherme dos Santos, di Memo Leten. Di subdistrik yang lain, tahanan dibawa ke ibukota subdistrik dan ditahan. Komisi mendengar adanya tahanan dari Subdistrik Cailaco yang ditahan di Kota Cailaco dan dari Subdistrik Lolotoe yang ditahan di Kota Lolotoe.⁷⁰ Berikut adalah kesaksian dari para tahanan yang mengalami penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi di berbagai pusat penahanan di Distrik Bobonaro:

- Hermenegildo Fernandes menjelaskan bagaimana pada 11 Agustus pemimpin UDT T1 dan anakbuahnya T51 dan T52 menangkap pemimpin Fretilin, utusan, dan anggota OPMT di Maliana. Para korban ditahan di kantor UDT di Maliana, kemudian dipindahkan ke Maumali di Desa Ritabou (Maliana, Bobonaro). Satu orang tahanan meninggal karena kelaparan.⁷¹
- Florindo Gonçalves, yang saat itu merupakan anggota Fretilin, mengatakan bagaimana pada Agustus 1975 (tidak ingat harinya), ia bersama sepuluh orang temannya yang masing-masing bernama José Gouveia, António Valente, António Nascimento, Daniel Caldas, Avelino Moniz, João Gonçalves, Filomeno da Costa, Rosario, Moises Nunes, dan Guilherme Moniz ditangkap di Dusun Ocelli, Subdistrik Lolotoe, oleh sekelompok tentara UDT yang dipimpin oleh T53 dan T54. Para korban ditempatkan di sebuah ruangan dan ditahan selama tiga hari. Mereka tidak diberi makan dan minum. Kemudian para tahanan dipindahkan dengan sebuah truk ke sebuah rumah di Lolotoe dan ditahan di sana kira-kira satu minggu.⁷²
- Adriano João menuturkan kepada Komisi bahwa pada 1975 ia adalah perwakilan Fretilin di Subdistrik Cailaco. Pada Rabu 13 Agustus 1975, sekitar pukul 16.30, para anggota UDT yang dipimpin oleh T55 datang dan menangkapnya, lalu mengikat tangannya dan menghajarnya. Adriano ditahan di Cailaco selama satu minggu bersama anggota Fretilin lain termasuk José Martins, José Barros, dan Marcelino Borges.⁷³ Pada periode terjadinya Gerakan Bersenjata UDT, Adriano juga mengalami perlakuan kasar dari anggota Apodeti, T56.* T56 menyerang Adriano setibanya di rumah dengan istrinya setelah mengunjungi dokter di Kota Cailaco. Adriano dihajar, diinjakinjak, lalu telinganya disayat dengan pisau. Selain perlakuan kasar secara fisik, Adriano menuturkan kepada Komisi bahwa ia juga mengalami trauma setelah ternak kambing, babi, dan sapi dirampas oleh UDT.

94. Di Desa Guda di Lolotoe, Komisi mendengar tentang dua peristiwa penangkapan secara kelompok. Sebastião Amaral menuturkan kepada Komisi bahwa tiga anggota Fretilin muda (Sebastião sendiri, Amaro Moniz, dan Candido Daniel da Silva) ditahan oleh kelompok UDT pada 14 Agustus. Ia mengatakan bahwa mereka dibawa ke rumah pemimpin UDT, T1, tempat mereka dihajar. Anggota-anggota UDT mengancam akan membunuh mereka dengan panah. Setelah lima jam, para tahanan dibawa ke “*quartel*” Maliana (stasiun penyiar radio di Maliana) dan ditahan selama satu minggu. Mereka tidak diberi makan selama dalam tahanan.⁷⁴

95. Masyarakat Guda mengutarakan bagaimana sekitar dua minggu kemudian, tepatnya pada 28 Agustus 1975, empat militan UDT yang berpangkat letnan satu (*Alferes* di *Segunda Linha*) menangkap delegasi Fretilin dan 14 pemuda lainnya di desa tersebut. Mereka dibawa ke Lolotoe dan diserahkan kepada T54 dengan tuduhan sebagai komunis. T54 mencoba memaksa mereka menerima kartu anggota

* T56 adalah anggota Apodeti. Ia adalah anak laki-laki dari *liurai* Atsabe, salah seorang pimpinan Apodeti. Ia adik mantan Partisan Apodeti. Tidak jelas apa yang mendorong dilakukannya penyiakaan oleh T56. (Wawancara CAVR dengan Erminio da Costa da Silva, Jakarta, Indonesia, 9 Agustus 2004.)

UDT, tetapi mereka menolak. Ia menyekap mereka semalaman di dalam jamban dan pada hari berikutnya ia memerintahkan agar mereka diikat dan dibawa ke Maliana. Tentara UDT kemudian menghajar, menendang, dan menginjak-injak para pemuda tersebut sampai muka mereka hampir tak dapat dikenali.⁷⁵

Manufahi

96. Jumlah penahanan ketiga terbesar oleh UDT yang dilaporkan kepada Komisi terjadi di Distrik Manufahi. Pusat penahanan utama di Manufahi adalah sebuah penjara di Subdistrik Same yang dibangun oleh Pemerintah Portugis. Laporan-laporan yang diberikan kepada Komisi memperkirakan antara 100 hingga 300 tahanan Fretilin ditahan di tempat itu selama Gerakan Bersenjata UDT.⁷⁶ Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa tahanan Fretilin di pusat penahanan UDT di Distrik Manufahi mengalami penyiksaan dan berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya.

97. Leonardo Paicheco, mantan utusan Fretilin, adalah salah seorang yang ditahan di Penjara Same. Ia menuturkan kepada Komisi bahwa pada 11 Agustus ia ditangkap oleh Mayor *Segunda Linha* T57 dan T58, keduanya pemimpin UDT di Same, yang disertai oleh sejumlah prajurit UDT. Ia yang pertama dibawa ke wilayah Orema di Holarua (Same, Manufahi), di mana Mayor T57 memukul dan menamparnya lalu menghajarnya dengan popor senapan. Mayor T57 kemudian memerintahkan orang-orangnya untuk mengikat Leonardo dan membawanya ke penjara Same. Di sana, Mayor T57 dan T59 berulang-kali memukuli Leonardo dan yang lain dengan popor senapan. Para tahanan tidak diizinkan keluar dari sel mereka selama 14 hari sehingga mereka terpaksa menjadikan sel sebagai jamban dan tinggal dalam kubangan air seni dan kotoran mereka.⁷⁷

98. Mateus Alves menjelaskan dalam pernyataannya tentang penangkapannya oleh pemimpin UDT T58 dan anakbuahnya, yaitu T68, T69, dan T70, di Dusun Deunai di Desa Holarua, Subdistrik Same. Pada saat penangkapan, T72 dan seorang anggota UDT lainnya memukul dan menendang Mateus Alves. Kemudian T73 mengikatnya dan membawanya menemui pemimpin UDT Mayor T57 dan T74. Mayor T57 mencambuk Mateus dengan cemeti (*chiquote*) hingga roboh. Kemudian ia dilemparkan ke atas truk bersama para tahanan lainnya dan kelompok tersebut dibawa ke rumah T75, pemimpin UDT yang lain di Desa Fore-Udo, Same. Setelah itu Mateus Alves dibawa ke Penjara Same di mana ia dan tahanan lainnya ditahan selama satu minggu tanpa diberi makan.⁷⁸

99. Beberapa laporan menunjukkan bahwa UDT juga menahan orang-orang Fretilin di berbagai pusat penahanan yang lebih kecil di Distrik Manufahi, di mana mereka juga mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Sebagai contoh, dua orang dari sebuah desa di Subdistrik Alas, ditahan oleh UDT dan dibawa ke Desa Wedauberek di Alas. Di sana mereka menjadi sasaran kerja paksa oleh Komandan UDT di Alas, T60, dengan kondisi kehidupan yang tak manusiawi.⁷⁹

Baucau

100. Di Baucau, UDT mengoperasikan dua pusat penahanan, yaitu Hotel Pousada Baucau* dan *Descascadeira*† di Bairro Central Bahu, Baucau. Pada sebagian besar kasus, tahanan ditahan selama beberapa hari pertama di Hotel Pousada, tempat mereka diinterogasi oleh pemimpin UDT di Baucau dan wakil presiden partai ini, T62, sebelum mereka dipindahkan ke *Descascadeira*. Komisi mendengar bahwa sekitar 30 orang anggota Fretilin yang ditahan di *Descascadeira* berasal dari Baucau, Lautém, dan Viqueque. Para mantan tahanan melaporkan bahwa mereka mengalami penganiayaan dan penyiksaan seperti dicambuk, ditendang, dan dipukuli.⁸⁰

101. Liborio Maria menuturkan kepada Komisi bahwa pada 11 Agustus 1975, ia dan Faustino dos Santos, keduanya anggota muda Fretilin, ditangkap oleh T61 dari UDT di Desa Bahu (Baucau, Baucau). Para korban dibawa ke Pousada Baucau di mana mereka diinterogasi oleh T62, ketua UDT di Baucau. Anggota UDT yang lain, T63, kemudian membawa Liborio, Faustino, dan 30 orang tahanan lainnya ke *Descascadeira*.⁸¹

102. Domingos de Sousa Freitas menuturkan kepada Komisi bahwa ia ditangkap oleh dua anggota UDT di rumah kepala dusun, T64, di Bacaiwa, *aldeia* Adagoa, Desa Uailili (Baucau, Baucau). Ia tidak menyebutkan tanggal penangkapannya. Anggota UDT yang lain lalu mengikat dan memukulinya, kemudian membawanya ke rumah pencucian (*Lavandaria*) di Desa Gariuai (Baucau, Baucau), di mana ia ditahan selama lima hari. Kepala Desa Uailili, T47, bersama dengan 20 orang anggota UDT yang lain, kemudian memindahkan Domingos Freitas ke Pousada Baucau. Selama di Pousada, T62 menghajarnya. Ia melarikan diri setelah Fretilin melancarkan reaksi bersenjata.⁸²

103. Pada 11 Agustus pukul 09.00, menurut laporan dari Diamantino da Costa, ia dan empat orang anggota Fretilin yang lain yang telah dituduh mengorganisasi masyarakat di Desa Ostico (Vemasse, Baucau) ditangkap di Ostico oleh pemimpin UDT T46 dan orang-orangnya yakni T48 dan T79 serta 10 orang anggota UDT lainnya. Mereka dibawa ke Pousada Baucau. Pada pukul 10.00, T62 menginterogasi para tahanan. Pada saat interogasi dilakukan, T62 menuduh bahwa mereka diperbudak oleh Vicente Reis (Sahe). Mereka ditahan di Pousada selama empat hari dan pada 16 Agustus 1975 mereka dipindahkan ke *Descascadeira*. Mereka dibebaskan pada 29 Agustus setelah Fretilin memulai reaksi bersenjata di daerah tersebut.⁸³

Liquiçá

104. Distrik Liquiçá menyediakan basis ketiga bagi UDT, yaitu di Subdistrik Maubara. UDT mengoperasikan dua pusat penahanan di Distrik Liquiçá, satu di bangunan Sekolah Dasar Liquiçá dan yang satunya lagi di bangunan Sekolah Dasar Maubara. Komisi mendengar bahwa sekitar 75 orang anggota Fretilin ditahan di Sekolah Dasar

* Hotel Pousada Baucau dikenal dengan nama Hotel Flamboyan pada masa pendudukan Indonesia.

† *Descascadeira* adalah sebuah tempat untuk penggilingan padi, pengelupasan kulit kelapa, dan proses-proses sejenis.

Liquiçá. Tahanan ini dipindahkan ke Sekolah Dasar Maubara sekitar 1 September.⁸⁴ Mereka disekap di Maubara selama hampir satu bulan. Perkiraan jumlah tahanan yang ditempatkan di Maubara tidak diperoleh. Komisi mendengar bahwa ketika Fretilin melancarkan reaksi bersenjata, kota pertama yang dikuasai di Distrik Liquiçá adalah Kota Liquiçá. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketegangan di Maubara dan tahanan menggunakan kesempatan itu untuk merusak pintu penjara dan melarikan diri.

105. Tidak ada laporan mengenai penganiayaan maupun kematian tahanan di kedua pusat ini. Namun Komisi tetap menemukan bukti tahanan yang mengalami penganiayaan di luar, sebelum mereka tiba di pusat penahanan. Albino da Costa Mouzinho, seorang wakil delegasi Fretilin di Desa Leotela (Liquiçá, Liquiçá), bersaksi:

Pada 12 Agustus 1975, utusan UDT T65 bersama orang-orangnya datang menangkap saya di sawah Pabo di aldeia Kaimegoluli, Desa Leotela. Saya langsung dipukul; mereka memukulku dengan tangan mereka sebanyak enam kali di telinga sampai berdarah hingga saya tidak dapat mendengar lagi. Lalu saya diperintah oleh seorang delegasi UDT yang lainnya, T66, untuk mencari Maubroke dan Asuleo [para anggota Fretilin] di Aldeia Paulara [Desa Leotela]...jadi saya pergi dengan T66 bersama orang-orangnya untuk menangkap Maubroke dan Asuleo, serta membawa mereka ke Nunloi di Desa Fatumasi, ke rumah Kepala Desa, T65. di sana saya melihat [seorang anggota Fretilin] yang dipanggil Maudasi, yang terluka berat, sedang berbaring di lantai dan ia sedang berteriak. Saya dipulangkan.⁸⁵

106. Marcelino Soares mengutarakan bagaimana di Vatuvou (Maubara, Liquiçá) pada 13 Agustus 1975, pendukung UDT menangkap dia dan lima orang anggota keluarganya dan menghajar mereka. Kepala para korban juga dicukur dan mereka kemudian diikat dan dibawa ke Maubara. Mereka ditahan di sana selama 27 hari sampai Fretilin menyerang Maubara dan mereka berhasil melarikan diri.⁸⁶

107. Daniel Pereira Martins bersaksi dalam pernyataannya bahwa ia ditangkap oleh seorang anggota UDT di Dusun Kota Lara, Desa Loidahar (Liquiçá, Liquiçá) pada 14 Agustus 1975 dan dibawa ke gedung Dewan Liquiçá (*conselho*). Ketika mereka tiba, anggota UDT yang lain mengancam akan membunuh Daniel Martins. Namun, ia dibawa ke Sekolah Dasar Liquiçá dan ditahan di sana selama lebih daripada dua minggu. Pada 1 September 1975, Daniel dan 67 orang tahanan lainnya dipindahkan ke Sekolah Dasar Maubara dan ditahan selama hampir satu bulan di sana. Daniel menuturkan kepada Komisi bahwa di Maubara, seorang anggota UDT bernama T66 selalu menampar para tahanan setiap kali mereka diberi makanan.⁸⁷

Lautém

108. Ketika gerakan bersenjata UDT meletus di Distrik Lautém, Kapten Lino da Silva, perwira Portugis dan komandan di *Companhia de Caçadores 14* (Kompi Senapan ke-14) datang ke Subdistrik Moro dan menjadikan komandan *Segunda*

Linha, Edmundo da Conceição Silva, sebagai tahanan rumah. Ia juga menyita 150 senjata api milik *Segunda Linha*, yang dibawanya ke Dili dan diserahkan kepada UDT.⁸⁸

109. Selain itu, pendukung UDT menangkap sejumlah anggota Fretilin dan menahan mereka di berbagai barak militer Kompi Senapan ke-14.⁷ Tahanan yang ditahan di sana tidak mengalami penganiayaan dan diberi makan. Komisi mendengar bahwa orang-orang ditahan di markas Kompi selama dua minggu atau kurang. Pendukung Fretilin lainnya dipanggil datang ke markas untuk diinterogasi oleh UDT lalu dipulangkan.

110. Menurut José Conceição, sejumlah tokoh Fretilin di Distrik Lautém, seperti Afonso Savio, Felipe Dias Quintas, dan lainnya, dibawa ke Baucau dan ditahan di Pousada.⁸⁹

Kerja paksa

111. Selain menerima informasi tentang perlakuan kasar fisik dan penganiayaan terhadap tahanan UDT, Komisi juga mendengar bahwa banyak tahanan yang dipaksa bekerja untuk UDT. Komisi menerima pernyataan yang menjelaskan bagaimana tahanan dipaksa membangun jalan, mengangkat batu, dan menggali kerikil serta memasak untuk pasukan UDT dan tahanan tanpa diberikan kompensasi. Sebagai contoh, Komisi mendengar bahwa pada 15 Agustus 1975 sekitar 500 orang ditahan di Same dan dipaksa bekerja membuat jalan sepanjang hari tanpa diberi makan.⁹⁰ Adriano João menyebutkan bahwa para tahanan di Cailaco (Bobonaro) dipaksa membangun jalan selama satu minggu yang menghubungkan Kota Cailaco dengan Desa Bilimau yang berbatasan dengan Hatolia (Ermera). UDT membebaskan para tahanan pada 4 September 1975 ketika jalan selesai dibangun.⁹¹ Demikian juga halnya di Maubara (Liquiçá), Marcelino Soares dan keluarganya (lihat paragraf 106) dipaksa membawa batu dan pasir untuk memperbaiki jalan dari Maubara ke Mauboke.⁹²

112. Perempuan juga digunakan sebagai pekerja paksa. Misalnya, Komisi mendengar bahwa ketika Gerakan Bersenjata UDT berawal, pendukung Fretilin yang laki-laki di Mau Chiga (Hatubuilico, Ainaro) meninggalkan keluarga mereka dan melarikan diri untuk bersembunyi di hutan. Pendukung UDT menangkap Antonieta Corte-Real dan perempuan lainnya dan membawa mereka ke Lesuati (Ainaro). Di sana, mereka dipaksa memasak untuk tentara UDT selama satu minggu. Ketika Fretilin menyerang basis UDT di Lesuata, Antonieta dan perempuan lainnya dapat melarikan diri.⁹³

113. Di Desa Ossu de Cima (Ossu, Viqueque), Seferina Freitas, kakaknya Adelino da Silva, dan utusan Fretilin di Ossu, João da Rocha, ditangkap oleh UDT. T71 dan orang-orangnya menahan tiga orang tersebut selama satu minggu. Selama masa penahanan, mereka dipaksa membawa batu dan kayu untuk membangun jalan. Mereka juga dipukuli, ditampar, dan ditendang.

* Pasukan pendudukan Indonesia kemudian menggunakan markas *Companhia Caçadores 14* sebagai pangkalan militer. Mereka menyebutnya "Markas Batalion 745 Kompi A".

Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh Fretilin (Agustus 1975-Februari 1976)

Pendahuluan

114. Pada 15 Agustus 1975, empat hari setelah dimulainya Gerakan Bersenjata 11 Agustus oleh UDT, Komite Sentral Fretilin (CCF) mendeklarasikan Pemberontakan Umum Bersenjata (*Insurreiçao Geral Armada*) dari markasnya di Aissirimou (Aileu). Deklarasi tersebut mendesak rakyat untuk melawan Gerakan Bersenjata tersebut dan hanya dalam hitungan hari, konflik internal antara UDT dan Fretilin pun pecah.*

115. Selama konflik bersenjata internal tersebut, Fretilin meniru praktik penahanan sewenang-wenang yang dilakukan UDT terhadap lawan politiknya. Di antara yang ditahan adalah para pejuang UDT, akan tetapi banyak juga yang anggota biasa atau pendukung UDT, anggota partai-partai politik lain, atau anggota keluarga mereka. Berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, sebagai warga sipil mereka berhak atas semua hak perlindungan bagi warga sipil. Dalam Laporan ini Komisi tidak membedakan antara pejuang dan warga sipil, karena semua tahanan berhak diperlakukan secara manusiawi dan tidak menjadi sasaran penyiksaan, perlakuan kejam, atau tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat kemanusiaan. Selain itu dalam banyak pernyataan yang diterima Komisi, mereka yang menyebut diri sebagai petempur sering ditangkap di rumah atau di desa mereka, dan bukan di tengah-tengah pertempuran.

116. Komisi menemukan bahwa Fretilin melakukan penahanan secara luas, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap warga sipil. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) memperkirakan sekitar 2.000 orang ditahan di pusat-pusat penahanan Fretilin setelah reaksi bersenjata menentang gerakan UDT.⁹⁴ Komisi, melalui proses pengambilan pernyataan secara naratif, telah merekam 1.369 kasus penahanan sewenang-wenang oleh Fretilin pada 1975. Dari 64,3% (880/1369) kasus-kasus ini yang melaporkan tepat pada bulan di mana pelanggaran ini terjadi, 95,2% (838/880) terjadi di bulan-bulan antara Agustus dan Desember, seperti bisa dilihat di tabel di bawah ini. Selain itu, 58,8% (517/880) dari korban dilaporkan memiliki afiliasi dengan UDT. Penahanan sewenang-wenang yang dihubungkan dengan Fretilin dan menyangkut anggota-anggota UDT, sangat terkonsentrasi di bulan-bulan Agustus dan September tahun 1975, seperti bisa dilihat di tabel di bawah ini.

* Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004. Deklarasi Fretilin di Aileu pertama kali dipublikasikan melalui pernyataannya pada 13 September 1975 yang menyatakan bahwa "pada pukul 15.45, tanggal 15 Agustus, Komite Sentral Fretilin menyadari bahwa tidak akan ada penyelesaian damai, karena itu Fretilin mendesak dilakukannya perlawanan bersenjata secara umum" (Lihat Helen Hill, *Stirings of Nationalism in East Timor: Fretilin 1974-78*, Otford Press, Sydney, 2002, hal.142)

Tabel 4: Jumlah penyiksaan yang dilaporkan, yang dikaitkan dengan Fretilin, menurut bulan kejadian, 1975

| Bulan | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------------|------------|
| Januari | 11 | 0,8 |
| Februari | 3 | 0,2 |
| Maret | 5 | 0,4 |
| April | 8 | 0,6 |
| Mei | 0 | 0 |
| Juni | 12 | 0,9 |
| Juli | 3 | 0,2 |
| Agustus | 338 | 24,7 |
| September | 289 | 21,1 |
| Oktober | 59 | 4,3 |
| November | 28 | 2,1 |
| Desember | 124 | 9,1 |
| Tak diketahui | 489 | 35,7 |
| Total | 1.369 | 100 |

Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

117. Bukti kualitatif yang diterima Komisi mengindikasikan bahwa orang yang ditahan oleh Fretilin pada umumnya menerima cukup makanan, tapi mereka ditahan dalam kondisi yang berjejal-jejal dan sangat kumuh. Banyak dilaporkan kekerasan fisik dan terkadang penyiksaan terhadap tahanan.

118. Penelitian statistik Komisi mengungkapkan bahwa pada 1975 sebagian besar penahanan yang dilakukan oleh Fretilin terjadi di distrik-distrik wilayah tengah, terutama di Dili, Aileu, Manufahi, dan Ermera seperti ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.^{*} Penelitian kualitatif Komisi, melalui wawancara dan Profil Komunitas, menunjukkan bahwa Dili juga menjadi salah satu tempat penahanan utama di kala konflik bersenjata internal. Hal ini sesuai dengan pandangan Komisi bahwa penahanan sewenang-wenang digunakan sebagai sarana konflik dan terkonsentrasi di tempat yang mengalami konflik paling intens.

Tabel 5: Jumlah penyiksaan yang dilaporkan, yang dikaitkan dengan Fretilin, menurut wilayah geografis, 1975

| Wilayah | Jumlah | Persentase |
|--------------|-------------|------------|
| Barat | 321 | 23,5 |
| Tengah | 806 | 58,9 |
| Timur | 225 | 16,4 |
| Oecussi | 17 | 1,2 |
| Indonesia | 0 | 0 |
| Total | 1369 | 100 |

Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

^{*} 58,9% (806/1369) dari penahanan tersebut dilaporkan di distrik-distrik pusat, dibandingkan dengan 23,5% (321/369) di distrik-distrik barat dan 16,4% di timur.

119. Fretilin tetap melakukan penahanan setelah invasi Indonesia, pada bulan-bulan awal 1976, walaupun pada tingkat yang jauh lebih rendah—150 kasus dilaporkan pada Januari - Februari 1976. Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, kasus-kasus ini sebagian besar terjadi di distrik-distrik wilayah timur: 64,7% (97/150).

Reaksi bersenjata Fretilin

Pemberontakan umum bersenjata

120. Rogério Lobato menerima pesan sandi dari Fretilin di Aileu, pada malam tanggal 15 Agustus di Dili,^{*} yang menandai dimulainya pemberontakan.⁹⁵ Kepada Komisi, ia menuturkan:

Pada malam 15 Agustus, mereka yang dari bagian transmisi memanggil saya. Saya hanya mendengar, “a minha mulher chegou bem, esta de saude.”...Saya sudah tahu bahwa mereka telah melancarkan “kudeta tandingan” (contra-golpe) di Aileu. Saya pun mulai mempersiapkan “kudeta tandingan” di Dili. Saya memanggil Komandan João Branco, Adão Cristovão, dan yang lain-lain. Kemudian kami menyusun rencana di ruang makan prajurit (sala dos soldados).[†]

121. Pada 17 Agustus, Fretilin mengambil alih barak militer Portugis di Aileu dan menahan perwira dan prajurit Portugis. Pada malam tanggal 17 Agustus itu, 44 orang anggota Fretilin bergerak mengepung pasukan Portugis di Aileu. Lucas da Costa menuturkan kepada Komisi:

[S]eluruh pasukan (tropas) sedang berkumpul untuk rapat. Kami pun mulai mengepung kompi itu dan bersembunyi di parit-parit. Yang pertama mendekati gerbang kompi adalah Nicolau Lobato, Abel Larisina, dan Alarico Fernandes. Sehabis rapat, komandan keluar dari pintu gerbang dan Nicolau keluar dari parit langsung menodongkan pistol ke komandan itu dan menyuruhnya diam. Nicolau memerintahkan kapten itu untuk segera menyerahkan komando kompi Aileu kepada Sersan José da Silva.[‡] Waktu itu, ada 11 orang tentara Portugis, yaitu lima orang perwira selebihnya sersan dan cabo [Kopral]. Mereka semua ditahan.⁹⁶

* Rogério Lobato dan anggota CCF yang lain di Aileu sepakat menggunakan sandi tersebut ketika Rogério datang ke Aissirimou, atas nama Lemos Pires, untuk berunding dengan anggota CCF di Aileu pada 15 Agustus 1975. Pesan terbaca: “A minha mulher ja esta à Aileu, chegou bem” (“Istri saya tiba dengan selamat di Aileu.” Rogério Tiago de Fatima Lobato merancang pesan ini ketika ia meninggalkan Dili dengan helikopter. Ia mendapat ilham mengenai pesan sandi tersebut ketika ia ingat istrinya di Dili dan memberitahu pesan itu kepada Komandan Gill António Gonçalves dan José da Silva. (Wawancara CAVR dengan Rogério Tiago de Fatima Lobato, Menteri Urusan Dalam Negeri Timor-Leste, Dili, 26 Agustus 2003.)

† Menurut Rogério Lobato, *sala dos soldados* adalah jenis bar yang dibangun untuk tentara Portugis, tempat mereka dapat memesan makanan dan minuman. (Wawancara CAVR dengan Rogério Lobato, 26 Agustus 2003.)

‡ Kapten itu bernama Horta. “Saudaraku [Nicolau Lobato] melucuti Horta.” (Wawancara CAVR dengan Rogério Lobato, 26 Agustus 2003.)

122. Reaksi bersenjata Fretilin di Dili juga dimulai dengan penahanan anggota militer Portugis. Pada pukul 01.00 dini hari tanggal 20 Agustus, Rogério Lobato dan Sersan Hermenegildo Alves, prajurit-prajurit Timor-Leste yang sudah berada di pihak Fretilin, menangkap Wakil Kepala Staf Portugis yang mengepalai Quartel Geral, yang juga merupakan kediamannya. Pagi itu juga, para prajurit Timor-Leste melucuti senjata sekitar 50 hingga 60 pasukan Portugis.⁹⁷

Alasan penahanan sewenang-wenang

123. Sejumlah pemimpin UDT yang melancarkan Gerakan 11 Agustus ditangkap dan ditahan, termasuk Wakil Presiden UDT, Cesar Mouzinho dari Baucau, Francisco Oliveira dan Mario Jaorez dari Dili, dan sejumlah pemimpin UDT lain dari sejumlah distrik. Mereka juga menangkap komandan kepolisian Portugis, Letnan Kolonel Maggiolo Gouveia.⁹⁷ Komisi juga menerima laporan bahwa sejumlah anggota Fretilin yang menangkap anggota UDT terdorong oleh keinginan balas dendam terhadap kekejaman yang dilakukan anggota UDT selama gerakan bersenjata tersebut.[†]

124. Sementara penyusupan pasukan Indonesia di wilayah barat semakin intensif, Fretilin juga mengarahkan perhatiannya kepada partai prointegrasi Apodeti. Filomeno Cabral menjelaskan bahwa anggota Apodeti ditangkap karena meningkatnya serangan militer Indonesia di kawasan barat dan karena adanya kelompok warga Timor-Leste di pengasingan yang telah dibentuk menjadi pasukan yang dikenal dengan nama 'Partisan'.⁹⁸ Lucas da Costa menyatakan:

Logikanya sederhana saja, di perang ini [di Timor-Leste] ada yang berkonspirasi dengan musuh untuk melakukan perang. Nah, siapa yang berkonspirasi itu adalah orang UDT dan Apodeti... Fretilin harus menghadapi serangan dari perbatasan. Pasukan kita mulai gugur, [termasuk] wartawan dari Australia [juga terbunuh].... Jadi tokoh-tokoh UDT dan Apodeti ditangkap semua.⁹⁹

125. Mari Alkatiri memberikan kesaksian kepada Komisi bahwa pemimpin Apodeti ditahan atas perintahnya pada 4 atau 5 Oktober 1975, setelah ia menerima laporan intelijen bahwa mereka tengah merencanakan percobaan kudeta terhadap Fretilin. Ia mengatakan saat ia diberitahu bahwa anggota Apodeti tengah berencana memulai percobaan kudeta dengan cara melempar granat pada saat pertemuan Komite Sentral Fretilin:

.....
* Mario Carrascalão menururkan kepada Komisi bahwa Maggiolo Gouveia dilepas dari tahanan UDT tidak lama setelah Gerakan Bersenjata 11 Agustus 1975 "karena ia membuat pernyataan politik bahwa ia memihak gerakan UDT." Mário Carrascalão berkata bahwa Maggiolo Gouveia pergi untuk bicara dengan anggota Fretilin setelah pembebasannya, tetapi ia ditangkap oleh Fretilin dan kemudian menghilang. (Kesaksian kepada Audiensi Publik CAVR mengenai konflik politik internal 1974-76, 15-18 Desember 2003. Lihat juga Mário Lemos Pires, *Descolonização de Timor*, bab: "O Golpe da UDT").

† Xanana Gusmão, Kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.

Saya memanggil Sersan Carmo. Saya berkata “Kamu lakukan operasi ini. Tangkap mereka semua.” Banyak orang Apodeti kami tangkap, hampir semuanya. Sersan itu menempatkan polisi ke dalam yang sekarang menjadi Undil (bangunan Universitas Dili).”

126. Para pemimpin Partai KOTA dan Trabalhista juga ditangkap, tetapi anggota biasa tidak ditangkap.¹⁰⁰

127. Pada tingkat individu, para korban melaporkan ditahan bila mereka diketahui sebagai pemimpin atau pendukung UDT atau Apodeti, atau berasal dari desa-desa yang berafiliasi dengan UDT atau Apodeti, atau jika mereka memiliki kartu anggota UDT atau dicurigai menjadi mata-mata untuk UDT atau Apodeti.¹⁰¹

Tempat penahanan

Dili

128. Markas (*Quarter Geral*, QG) tentara Portugis di Taibessi, Dili, adalah bangunan pertama yang diduduki Fretilin pada 20 Agustus. Kebanyakan pemimpin dan anggota UDT yang ditangkap selama aksi bersenjata ditahan di sana, termasuk César Mouzinho, Francisco Oliveira, dan mantan komandan polisi Portugis, Letnan Kolonel Maggiolo Gouveia. João Oliveira adalah sipir penjara Fretilin di QG.¹⁰² Rogério Lobato, komandan pasukan bersenjata Fretilin ketika itu, menuturkan kepada Komisi bahwa sekitar 1.000 pendukung Fretilin, banyak di antara mereka membawa senjata, berkumpul di QG untuk melihat para pemimpin UDT yang ditahan. Ia mengatakan bahwa mereka memukuli pemimpin UDT, César Mouzinho, dan ketika mereka lepas kendali, seorang tahanan lainnya, Mateus Ferreira dari Same, yang tengah digiring ke sel, terinjak-injak oleh kawanannya tersebut sampai mati.¹⁰³

129. Kesaksian dan pernyataan kepada Komisi mengindikasikan bahwa para tahanan di QG mengalami berbagai macam penganiayaan, penyiksaan, dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi lainnya. Fretilin mengakui bahwa terjadi sejumlah kasus kekerasan fisik yang tak terkendali terhadap para tahanan. Rogério Lobato mengatakan bahwa anggota Fretilin mulai menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan tindak kekerasan terhadap para tahanan. Ia mengatakan bahwa Fretilin sebagai organisasi “tidak pernah memberi perintah langsung untuk melakukan hal-hal buruk terhadap seseorang, akan tetapi anggota Fretilin sebagai individu terkadang menyalahgunakan kekuasaan mereka dan melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.” Ia berkata kepada Komisi:

Kadang-kadang mereka masuk ke dalam tempat tahanan dan memanggil para tahanan dan memukulnya. Kadang bukan karena masalah [politik], melainkan hanya karena problem lama. Saya tahu kadang-kadang ini terjadi karena seseorang merebut pacarnya dan

* Mari Alkatiri, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal, 15-18 Desember 2003.

kini mereka memanfaatkan kesempatan untuk memukulnya. Saya tahu ini. Orang-orang ambil kesempatan untuk memukul yang lain dan main hakim sendiri. Namun beberapa orang memukul karena mereka marah karena perang.

Mereka memukul Maggiolo dan yang lainnya...tapi saya ingin mengatakan tentang Maggiolo Gouveia, banyak rekan dari Fretilin dan Falintil yang masuk ke dalam selnya dan memukulnya pada saat itu. Kepala penjara, Sersan João Oliveira, dia datang menghadap saya sambil melaporkan tentang tingkah-laku mereka yang di luar batas. Mereka ke sana hanya untuk memukul Maggiolo Gouveia. [Saya berkata] “Kalau begitu kamu panggil Maggiolo ke sini” dan saya menerimanya di ruang kerja saya, yang dulunya milik Maggiolo. Saya mengatakan, “Tuan Letnan Kolonel yang baik, saya mendengar apa yang menimpa Anda di tempat tahanan. Saya akan mengeluarkan Anda dari tempat tahanan dan membawa ke rumah sakit.” Pada saat itu saya taruh dia [Maggiolo] di rumah sakit dan di bawah perlindungan Palang Merah Internasional.¹⁰⁴

130. José Ramos-Horta adalah salah seorang anggota Fretilin yang tidak terkesan dengan perlakuan terhadap anggota UDT di Markas QG. Ia juga tidak senang dengan perlakuan terhadap para tahanan di Rumah Sakit Militer Lahane di Dili. Beberapa tahanan dipindahkan ke Rumah Sakit Lahane setelah menderita penyiksaan berat di Markas.

*Saya kunjungi rumah sakit militer di Lahane. Telah ditransfer ke sana Mouzinho, wakil presiden UDT, dan anggota UDT lainnya, di antaranya Agapito Mariz, Fernando Luz, dan Chico Oliveira. Mouzinho dipukul hampir mati pada saat menyerah kepada pasukan Fretilin di Baucau...Chico Oliveira...kelihatan hampir buta karena pemukulan biadab yang dialaminya.**

131. Komisi menerima sejumlah laporan dari para korban penganiayaan seperti itu. Francisco Gonçalves mengatakan kepada Komisi, bahwa anggota Fretilin, T80, memerintahkan pasukannya untuk menyiksa Francisco Gonçalves ketika ia masih menjadi tahanan di QG. Francisco masih berumur 17 tahun ketika itu dan belajar di Liceu Dr Francisco Machado di Dili. Ia telah belajar di Mozambik dan setelah kembali ke Timor-Leste pada 1974 dia menjadi anggota kelompok pemuda UDT, Lesvalt. Ia tidak terlibat dalam Gerakan Bersenjata UDT, akan tetapi Fretilin menangkapnya di Gereja Motael pada 27 Agustus dan membawanya ke markas

* José Ramos-Horta, *Timor-Leste Amanha Em Dili*, hal. 107-113. Dalam buku dan halaman yang sama, Ramos-Horta menulis, pada saat ia datang di rumah Nicolau Lobato untuk makan siang, ia mengatakan kepada Nicolau tentang apa yang terjadi di penjara. Ia mengatakan kepada Nicolau bahwa perbuatan tersebut harus dihentikan. Jika tidak, ia akan memanggil utusan ICRC dan wartawan asing yang akan menyebarkan perbuatan tersebut. Sebelum itu Ramos Horta mendengar bahwa seorang sersan dua dan seorang wakil komandan Fretilin telah mencambuk Maggiolo Gouveia dan Victor Santa .

Fretilin. Pada 28 atau 29 Agustus, T80 datang ke penjara dan menemukan nama Fransisco dalam daftar tahanan. Ketika dipanggil untuk keluar dari sel, Fransisco mendengar T80 berkata ke penjaga: “Ini dia *playboy*...dari Mozambik...cambuk dia 150 kali.” Gonçaves jatuh pingsan setelah dicambuk 17 atau 18 kali dan ia dikembalikan lagi ke dalam selnya.¹⁰⁵

132. Felix Fatima Ximenes melaporkan bahwa pada 12 September 1975, dua anggota Fretilin, T81 dan T82, menangkap dirinya dan António Soares di Maubara (Liquiçá) karena mereka anggota UDT. Mereka dibawa ke Dili dan ditahan di QG selama dua bulan. Selama dalam tahanan, mereka dipukuli oleh anggota Fretilin yang juga mantan sersan di dalam ketenteraan Portugis, T83, yang bertindak atas perintah T84, orang yang bertanggung jawab terhadap pemukulan para tahanan. Pada 19 November, Fretilin memindahkan mereka ke Penjara Balide.¹⁰⁶

133. Seorang anggota UDT melaporkan bahwa pada September 1975 ia ditangkap oleh Komandan Fretilin T85 di Dili dan dibawa ke Markas QG. Ia mengatakan bahwa ia dan dua orang lainnya, termasuk seorang kepala polisi, dicambuk oleh penjaga Fretilin T84. Mereka diperintahkan berbaring di bawah terik matahari dan saling pukul.¹⁰⁷

134. Penelitian Komisi menunjukkan, bahwa tidak seperti UDT, Fretilin tidak membiarkan para tahanan kelaparan. (Lihat bagian Penahanan dan Penyiksaan oleh UDT pada 1975, paragraf 50 – paragraf 113, di atas.) Mari Alkatiri mengatakan kepada Komisi bahwa anggota Fretilin dan tahanan makan makanan yang sama:

*Dalam hal makanan, saya ingat saya makan apa yang dimakan oleh para tawanan. Kami makan makanan yang sama. Bagaimanapun juga, semua makanan itu berasal dari dapur yang sama.*¹⁰⁸

135. Mari Alkatiri memberi kesaksian kepada Komisi bahwa Fretilin juga menahan anggota Fretilin di QG mulai sekitar Oktober. Ia mengatakan bahwa mereka ditangkap karena tindakan lewat batas yang mereka lakukan selama konflik internal dan apa yang terjadi sesudahnya.¹⁰⁹

Comarca Balide

136. Sejak pertengahan September, Fretilin mulai menggunakan penjara utama Portugis di Balide (Dili) yang dikenal dengan nama Comarca.¹¹⁰ Fretilin menempatkan sekitar 390 tahanan di sana, termasuk anggota UDT maupun Apodeti.

137. Pernyataan yang diterima oleh Komisi menunjukkan bahwa tawanan di Comarca dibawa dari sejumlah distrik, termasuk Dili, Liquiçá, Aileu, dan Ermera.* Lamberto Ximenes menuturkan kepada Komisi bahwa ia dan warga sipil lainnya

.....
* Wawancara CAVR dengan Anselmo dos Santos, Desa Vaviquidia-Maubara, Liquiçá, 9 Maret 2004. Anselmo dos Santos ditangkap di Maubara, mula-mula ditahan di QG lantas dipindahkan ke Balide. Anselmo dos Santos memperkirakan 64 dari 390 tahanan di Balide berasal dari Maubara. Mereka semua selamat dan kembali ke Liquiçá setelah ABRI mengalahkan Fretilin di sana.

ditahan oleh pasukan Fretilin di Leimea Leten (Atsabe, Ermera). Mereka dipaksa bekerja membangun jalan selama tiga hari dan kemudian dikirim ke Comarca di Dili. Mereka berada di sana sampai invasi Indonesia atas Dili pada 7 Desember.¹¹¹

138. Sebuah pernyataan yang diterima oleh Komisi menyatakan bahwa dua tahanan ditahan selama dua bulan di Markas QG sebelum mereka dipindahkan ke Comarca 19 November. Di sana mereka bergabung dengan anggota senior Apodeti yang sebelumnya ditahan di Aileu, termasuk Arnaldo dos Reis Araújo, António da Silva, Mahrus Alkatiri, José António dos Reis, José Gastão Melo Araújo, Herminio da Costa Silva, Ernesto, dan Frederico Almeida Santos.¹¹² Frederico Almeida dos Santos menuturkan kepada Komisi bahwa ia mula-mula ditahan di Museum, dekat Kantor Pemerintah (sekarang Palácio do Governo) di pinggir pantai, sebelum ia dipindahkan ke Aileu dengan 12 tahanan lainnya dan akhirnya dikirim ke Comarca di Balide pada 20 Oktober 1975 atas perintah T86.¹¹³

139. Komisi tidak menemukan bukti kekerasan, penyiksaan, ataupun perlakuan kejam lainnya yang dilakukan terhadap para tahanan UDT atau Apodeti di Comarca. Anselmo dos Santos, mantan tahanan di Comarca, menggambarkan kondisinya:

Pada saat kami ditahan di Penjara Balide, kami dijaga oleh empat orang penjaga Fretilin dan seorang komandan yang bernama [Filomeno] Gomes dari Atsabe. Ia orang yang baik. Kami ditahan di Penjara Balide sejak September sampai Desember [1975]. Tiap pagi, setelah sarapan kami melakukan pekerjaan seperti menyapu dan pekerjaan lainnya seperti mencangkul tanah dan membersihkan rumput di Caikoli [di belakang penjara].

Pada awalnya, setiap pagi kami sarapan ubi, roti (pão), dan kopi. Siang dan malam tetap dikasih makan. Namun, memasuki bulan November, sudah mulai krisis. Stok makanan yang dibawa dari timur sudah tidak ada lagi dan ubi jalar [feuk ropa] dari Ermera pun sudah habis. Kami tinggal menunggu mati saja. Pagi kami hanya sarapan dengan kopi, terserah mau minum sampai berapa gelas, tapi tidak disertai makanan lagi. Siang hanya makan sayur kangkung, begitu pun malam. Hal ini diakibatkan stok makanan sudah betul-betul habis. Hal ini berlanjut terus hingga akhir November.¹¹⁴

Aileu

140. Aileu adalah basis utama Fretilin. Di basis ini terdapat dua pusat penahanan, yakni *Companhia* di Aissirimou (barak militer yang diambilalih oleh Fretilin) dan gudang kopi besar. Fretilin menahan para pemimpin partai oposisi di *Companhia* dan mengirim anggota biasa ke gudang kopi.¹¹⁵ Kedua pusat penahanan tersebut juga menampung tahanan dari Distrik Aileu dan dari wilayah lainnya. Komisi menerima laporan mengenai penyiksaan dan penganiayaan para tahanan yang terjadi di pusat tahanan ini.

141. Amelia Mesquita menuturkan kepada Komisi bahwa ia dan delapan anggota keluarganya termasuk yang pertama ditahan di gudang kopi Aileu itu. Amelia dan keluarganya adalah petani dari Desa Selo-Malere di Aileu. Pada Agustus 1975, sekelompok pasukan Fretilin yang bersenjata panah dan tombak datang ke desanya dan menangkap dirinya, ibunya, Lourença da Costa, dan ayahnya, Carlos de Araújo, saat mereka berada di kebun kopi. Mereka juga menangkap lima teman Amelia, dua di antaranya perempuan. Fretilin menangkap mereka karena dicurigai menyembunyikan senjata—hal yang disangkal ayah Amelia. Mereka diseret sepanjang jalan dan diikat serta dipukuli. Mereka mengikat paman Amelia ke tiang bendera dan memukulnya sampai berdarah.*

142. Rafael Nascimento menuturkan kepada Komisi, Fretilin menangkapnya di desanya di Aileu. Ia mengatakan bahwa ia diikat bersama seorang tawanan lainnya, Martinho, dan ditempatkan di gudang kopi Aileu itu. Ia mengatakan bahwa T87 memukul kepalanya dengan helm yang menyebabkannya cedera berat.† Ia mengatakan bahwa ia tidak diobati meskipun kepalanya luka parah.¹¹⁶

143. Ada tempat-tempat lain yang digunakan sebagai pusat penahanan sementara yang agak kecil di Aileu. Di Subdistrik Laulara, Komisi diberitahu ada sejumlah orang yang ditahan di Desa Unmenlau. Domingos da Silva Soares menceritakan bahwa temannya, Afonso Mesquita (anggota Fretilin), ditangkap di Desa Boklelo pada 19 Agustus oleh komandan Fretilin T88 dan pasukannya dan dibawa ke Desa Unmenlau. Ia dapat melarikan diri, tapi ayahnya yang datang mengunjunginya ditahan dan selanjutnya dibunuh. Menurut Domingos, semua orang Boklelo diikat dan digiring ke Unmenlau karena dicurigai menyembunyikan buron bernama Marcal. Mereka dibebaskan setelah diinterogasi.¹¹⁷

Manufahi

144. Manufahi adalah distrik lain tempat terjadinya pertempuran sengit selama masa gerakan bersenjata oleh UDT dan sekali lagi selama reaksi bersenjata oleh Fretilin. Pada 27 Agustus 1975 pasukan Fretilin menyerang dan merebut Same (Manufahi), hingga memaksa pasukan UDT mundur ke kawasan timur.¹¹⁸ Fretilin menangkap dan menahan beberapa anggota UDT dan Apodeti yang tidak sempat melarikan diri. Mereka ditahan sementara di Sekolah Dasar di Same sebelum dipindahkan ke Penjara Same.¹¹⁹ Sejumlah orang juga ditangkap di Same selama September 1975.

145. Komisi menerima kesaksian korban-korban yang menyatakan bahwa Fretilin telah melakukan kekejaman fisik, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap para tahanan di penjara subdistrik di Same.

146. Monis da Maia adalah salah seorang tahanan di penjara ini. Ia menuturkan kepada Komisi bahwa Fretilin menangkap dan menahannya sementara di

* Amelia Mesquita mengatakan keenam anggota keluarganya adalah Domingas Mendonça, Sarah de Araújo, Aleixo, Serkoli, Romaldo, dan António.

† Tahanan lainnya, seperti João da Costa dan Assis dos Santos, menegaskan bahwa T87 sering memukul dan menyiksa tahanan di Aileu.

sekolah dasar itu ketika mereka merebut Same. Ia mengatakan, pasukan Fretilin menganiayanya saat ia ditangkap dan hal ini terus berlanjut sampai di penjara, sampai ia pingsan dua kali. Ia memberikan kesaksian kepada Komisi:

*Pada saat kami pergi ke kota untuk menyaksikan kedatangan pasukan Fretilin, mereka [pasukan Fretilin] mengatakan, “Kalian lihat saja dia?” Saat itu juga, semuanya datang dan memukul saya hingga saya pingsan. Seorang tentara bernama T34, dulu di Dili kami saling kenal, dia yang datang mengangkat saya dan meletakkan saya di sekolah. Tak lama kemudian mulai dimasukkan lagi beberapa orang termasuk Celestino Soares.**

Suatu hari, seorang anggota kementerian Fretilin, T90, mengunjungi penjara dan ia menyuruh tahanan keluar dan berbaris, baru dipukul dengan ranting pohon. Tubuh terluka semua, sayapun pingsan. Kemudian hari berikutnya, giliran anggota CCF, T91, dengan senjata G3 di tangan masuk ke penjara dan menyuruh semua tahanan keluar untuk dipukul. Tubuh saya masih terluka, jadi saya menolak keluar. Saya katakan pada T91, “Kamu tembak saja saya, saya tidak akan keluar.”

Tahanan yang lain dikeluarkan, setelah dipukul baru dimasukkan lagi ke penjara. Setelah itu, teman T91, T92, masuk lagi ke penjara dan menghajar kepala saya dengan sebuah alu hingga membuat saya pingsan. T92 mengira saya sudah mati, jadi ia menyuruh membuang saja tubuh saya ke dalam kebun kopi. Setelah mengatakan demikian ia pun pergi. Dengan pertolongan Tuhan saya tidak mati.

Pada saat upacara bendera, kami 11 orang dikeluarkan dari tahanan dan disuruh berbaris untuk dibunuh. Tapi kemudian Mauhunu berubah pikiran dan mengatakan, “Kalau mereka ini kita bunuh semua, lalu setelah merdeka kita mau memerintah siapa? Memerintah pohon dan batu?” Kami tidak jadi mereka bunuh dan dimasukkan lagi ke sel kami...

Pada saat dilakukan pengadilan rakyat (Justiça Popular), Fretilin meminta semua rakyat untuk datang ke penjara subdistrik, lalu tahanan diperintahkan melangkah keluar sel satu per satu untuk diadili. Tahanan yang mendapatkan tuduhan berat dibawa ke Aileu oleh Fretilin. Saat itu yang menjadi pimpinan Fretilin di sana adalah António Cepeda. Ketika giliranku dibawa ke hadapan pengadilan rakyat, aku tidak punya salah apa-apa, sehingga rakyat pun diam saja. Tapi seseorang lagi menghasut rakyat, “Katakan dia yang memukul kamu,” tapi rakyat menolak, kecuali satu yang mengatakan, “Dia mengata-ngatai kasar [tolok] kakekku.” Aku diam saja sambil mengangkat tangan. Jadi akupun dibawa ke Aileu, hanya karena dituduh mengeluarkan kata-kata kasar kepada kakeknya.¹²⁰

* Celestino Soares adalah Sekretaris Daerah Apodeti di Same. Seorang prajurit Fretilin menembaknya hingga tewas (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa)

147. Komisi menerima kesaksian yang menggambarkan penangkapan Fretilin terhadap anggota UDT yang telah melarikan diri dari Same ke kawasan timur. Mereka dibawa kembali ke Same dan ditahan di penjara subdistrik. Setelah ditangkap, mereka mengalami tindak kekerasan fisik dan penyiksaan. Seorang korban, João da Costa, menuturkan kepada Komisi bahwa pasukan Fretilin menganiaya dan memperlakukan dia dan anggota UDT lainnya dengan kejam dalam perjalanan dari Venilale (Baucau), tempat ia ditangkap. João da Costa mengatakan kepada Komisi tentang perlakuan Fretilin terhadap tawanan di penjara subdistrik.¹²¹

Di penjara subdistrik, pada sore hari mereka [Fretilin] mengeluarkan kami untuk diadu berantam. Tahanan dengan tahanan saling berkelahi. Pertama mengeluarkan dua orang kakak saya dan mematahkan ranting pohon kopi dan disuruh untuk saling memukul. Seperti adu ayam dan penonton mengelilinginya. Setelah ranting-ranting pohon itu patah semua, giliran petugas penjara yang memukul lagi, kemudian dimasukkan ke penjara. Saya dengan saudara sepupu saya, José Tilman. Saya memukul dia sampai jatuh. Setelah itu giliran petugas penjara yang memukul kami. Kami setiap hari mendapat pukulan. Satu bulan ditahan di Same, kemudian mereka membawa kami ke Aileu.

148. Mereka yang ditempatkan di penjara subdistrik dibawa ke Aissirimou di Aileu awal Oktober 1975.

Ermera

149. Jumlah penahanan oleh pihak UDT pada 1975 paling banyak terjadi di Distrik Ermera. Ketika pasukan Fretilin memasuki Ermera, Fretilin menjawabnya dengan setimpal dan Komisi menerima banyak laporan mengenai penahanan pada Agustus, khususnya di Subdistrik Railaco dan Subdistrik Ermera. Fretilin menawan anggota UDT dan Apodeti di bangunan yang sebelumnya dipakai UDT untuk menyekap tahanan Fretilin, seperti gudang di Aifu (lihat bagian “Penahanan dan Penyiksaan oleh UDT 1975” di pusat-pusat penahanan di Distrik Ermera, di atas). Banyak tahanan yang langsung dipindahkan ke distrik tetangga Aileu.¹²² Berbagai sumber melaporkan kepada Komisi bahwa tawanan dari UDT dan Apodeti di Ermera dianiaya oleh tentara Fretilin yang menangkap dan menahan mereka. Berikut adalah beberapa contoh penganiayaan dan tindakan kejam dan tidak manusiawi lainnya terhadap para tawanan yang dilaporkan ke Komisi:

- Pedro Madeira, seorang anggota UDT di Matata (Railaco, Ermera), menuturkan bahwa ia ditahan pada 20 Agustus oleh seorang anggota Fretilin, T94, dan dibawa ke Railaco; di sana ia ditahan selama tiga bulan. Ia mengatakan bahwa selama penahanan itu, ia ditendang dan dipukuli dengan popor senapan. Ia kemudian dipindahkan ke Aileu dan berada di sana selama tiga hari sebelum dilepaskan.¹²³

- Komisi mendapat pemberitahuan bahwa Adão Exposto ditangkap oleh anggota Fretilin, T95, T96, dan T97, yang memukulinya amat parah dan membawanya ke Aileu di mana ia diinterogasi oleh Presiden Fretilin, sebelum dikembalikan ke Railaco dan ditahan.¹²⁴
- Lamberto Ximenes mengatakan kepada Komisi bahwa ia terlibat dalam Gerakan Bersenjata UDT di Dili dan kemudian lari ke desanya Leimea Leten (Atsabe, Ermera). Ia mengatakan, pada 20 Agustus Fretilin menangkapnya bersama banyak warga sipil lain yang menjadi anggota UDT dan memaksa mereka membuat jalan selama tiga hari. Lamberto sendiri kemudian dipindahkan ke Comarca di Dili.¹²⁵
- Domingos da Silva, seorang anggota UDT, menceritakan mengenai penangkapan tiga anggota UDT di Loro Hou, Desa Lisipat (Letefoho, Ermera), oleh Fretilin. Mereka dibawa ke Tali Koto, di sana satu orang dibunuh dan dua orang lainnya, yaitu Lino dan Maubere Kohe, ditahan.¹²⁶
- José Dofan bersaksi bahwa pada September 1975, T99, seorang simpatisan Fretilin, menahan saudara iparnya, Feliciano (nama keluarga tidak diberikan), dan ibunya, Soe Leki, di Bernukera. Mereka ditahan selama satu malam di markas Fretilin di mana Feliciano dipukuli, diikat, dan diseret di tanah hingga berdarah. Punggung ibunya juga terluka. Hari berikutnya mereka dibawa ke Maulmeta di Desa Seloi (Aileu), tempat mereka ditembak dan dibunuh.¹²⁷
- Seorang anggota pasukan UDT ditangkap dan ditahan oleh pasukan Fretilin atas perintah Komite Regional Ermera. Saat ditawan di Ermera, dia dipukuli oleh T100 dan T101.¹²⁸
- Felisberta de Jesus menuturkan kepada Komisi bahwa pada awal September 1975 suaminya, António Ximenes, yang menjadi anggota UDT, menyerahkan diri kepada sekretaris Komite Regional Ermera, Florentino de Jesus Martins. Ia menyerahkan diri di Erusa, Desa Talimoro, dan Fretilin membawanya ke Desa Humboe (Ermera, Ermera) dan menahannya di sana selama enam hari. Selama itu katanya, suaminya dipukuli, ditendang, diempaskan ke tanah, dan diseret sampai berdarah-darah oleh tiga anggota Fretilin, T102, T103, dan T104. Pada 17 September António Ximenes ditangkap lagi oleh Fretilin bersama empat anggota UDT di desa tersebut dan sejak itu menghilang.¹²⁹

150. António da Silva Barreto, seorang anggota UDT waktu itu, mengatakan kepada Komisi mengenai penahanannya pada awal September 1975:

Pada tahun 1975, saya adalah seorang pendukung militan partai UDT. Ketika kudeta tandingan terjadi pada tanggal 20 Agustus, UDT tidak dapat bertahan dan semua pemimpin lari ke Atambua...bersama dengan sebagian besar penduduk Poerema, yang menjadi anggota UDT. Aku tidak ikut lari. Pada bulan September pemimpin Fretilin Ermera Pedro Gonçalves Lemos memerintahkan saya pergi ke Fatubolu [Hatolia, Ermera], untuk mengambil sepucuk senjata dari Napoleão.

Ketika saya menjejakkan kaki di tangga Gereja Ermera, saya ditangkap oleh T105 dan pasukan Fretilin dari Aileu dan Maubisse. Mereka mengikat tangan saya di belakang punggung saya dan kemudian menggunakan bayonet, akan tetapi saya tidak jatuh. Kemudian mereka menghantam, menendang, dan memukul saya tetapi saya tidak jatuh. Karena itu mereka mengeluarkan sebilah pedang dan memukuli batok kepala saya sampai mengeluarkan banyak sekali darah. Mereka bermaksud membawa saya pergi untuk membunuh saya, tetapi pemimpin Fretilin Ermera Manuel Barreto dan Komandan Teky datang dan menyelamatkan saya. Mereka membawa saya ke rumah sakit untuk mengobati luka di kepala saya. Ketika saya sembuh, saya membawa penduduk Fatubolu untuk menyerahkan diri di Ermera.¹³⁰

151. Bagaimanapun, hal ini tidak melindungi António Barreto dari kecurigaan dan penganiayaan lebih lanjut. Pada September 1975, ketika tentara Indonesia menyusup masuk ke Aifu (Ermera, Ermera), António dan rekannya Mau Talo, Alberto da Silva, dan Mau Sama ditangkap oleh Fretilin atas tuduhan telah membantu Indonesia. Empat orang itu dibawa ke Fatubessi dan di sana mereka diinterogasi oleh pemimpin Fretilin T106, T107, dan T108. Selama interogasi, mereka dipecut bertubi-tubi dengan cambuk pendek (*chicote*) dan kemudian ditahan di Fatubessi selama enam bulan.¹³¹ Komisi diberitahu tentang sejumlah tempat lain yang digunakan sebagai tempat penahanan di Distrik Ermera, termasuk penjara Raimerhei, di Talimoro dan Raimea (Ermera, Ermera). Orang yang pernah ditahan di tempat ini juga melaporkan mengalami penganiayaan oleh pasukan Fretilin yang menangkap mereka.¹³²

Ainaro

152. Anggota UDT dan Apodeti yang ditahan di Distrik Ainaro ditempatkan di sejumlah lokasi dan mereka juga melaporkan penganiayaan, saat penangkapan dan selama penahanan. Pusat penahanan antara lain di Desa Aituto (Hato Builico), markas Fretilin di Maubisse, dan di Aimegudo (Hato Builico).¹³³ Beberapa mantan tahanan dari Distrik Ainaro melaporkan telah dianiaya dan disiksa.

153. Seorang mantan anggota UDT mengatakan kepada Komisi bahwa ia ditangkap di Ainaro Kota pada 1975 (bulan tidak diketahui) oleh seorang anggota Fretilin bernama T109 dan orang-orangnya, atas perintah utusan Fretilin bernama T110. Ia mengatakan, ia ditangkap dan disiksa karena mereka mencurigai ia telah membunuh anggota Fretilin.¹³⁴

Baucau

154. Di Baucau, Fretilin juga menggunakan bangunan yang sebelumnya dipakai oleh UDT sebagai tempat penahanan. Penjara utama adalah *Descascadeira* (bangunan yang digunakan untuk mengupas biji-bijian seperti kelapa, kopi, dan padi) di Bahu, di pusat Kota Baucau.¹³⁵ Komisi juga memperoleh laporan bahwa tahanan disekap oleh Fretilin di markasnya di Subdistrik Vemassee.¹³⁶

155. Komisi mendapat pemberitahuan bahwa anggota Fretilin di Baucau merespons gerakan bersenjata UDT dengan membalas dendam. Ia mengatakan bahwa Fretilin menyerang Hotel Pousada, yang sebelumnya digunakan UDT untuk menahan dan menyiksa anggota Fretilin. Fretilin kemudian menahan pemimpin UDT dan Apodeti di *Descascadeira*, termasuk anggota UDT Manuel Belo, Laurentino Gusmão, dan José Viana Freitas, pemimpin Apodeti Mauricio de Andrade Freitas, Clementino dos Reis Amaral, dan Kepala Desa José Piter. Para tahanan ditampar dan ditendang amat parah.¹³⁷

156. Clementino dos Reis Amaral mengatakan bahwa begitu Fretilin menguasai keadaan, mereka menahan hampir semua kepala desa dan kepala subdistrik, yang di daerah Baucau umumnya adalah pendukung UDT. Ia mengatakan bahwa Fretilin memenjarakan dirinya berikut 170 orang lainnya:

Saya dipenjara lebih dari 100 hari. Di Penjara Baucau terdapat lebih dari 170 orang, yang semuanya dipenjara bersama-sama. Ada banyak orang-orang penting di Baucau: para liurai, kepala desa. Semua orang penting ditempatkan di penjara karena pada waktu itu para kepala desa yang ada di Baucau adalah anggota UDT. Karena hal itu, kami semua dipenjara. Anda bisa mengatakan, bahwa orang ini telah menyumpahi, orang itu memukul temannya, dan begitulah semuanya terjadi.¹³⁸

157. José Viana Freitas memberi kesaksian kepada Komisi tentang penganiayaan yang dilakukan Fretilin di tempat penahanan:

Pada tanggal 20 Agustus 1975 di Naulale, di Desa Uatolari [Vemasse, Baucau], saya tengah bersama dengan ayah saya Pedro Viana Freitas, ibu saya Ana Maria da Costa, istri saya Helena, dan adik saya Domingos Viana dan Abel Viana [semuanya adalah anggota Apodeti]. Fretilin datang dan menangkap kami pada pukul 6 sore. Ada tujuh orang dari Fretilin...[menyandang senapan]; tetapi saya hanya tahu salah seorang di antara mereka, yakni T113. Mereka datang ke rumah kami dengan menyandang senjata, memanggil kami keluar, dan membawa kami ke markas Fretilin di Baucau.

Mereka tidak melakukan apa-apa selama perjalanan. Kami hanya berjalan ke Hotel Flamboyan [Pousada] Baucau yang kami capai sekitar jam 11 malam. Di sana, seorang pemimpin Fretilin hanya memerintahkan kami untuk tidur. Pagi berikutnya kami dibawa ke Descascadeira. Di sana banyak orang telah ditahan, 160 orang, semuanya pria. Saya hanya tahu Clementino dos Reis Amaral. Para pemimpin pasukan itu tidak memukul kami, tetapi ketika mereka pergi, anggota Fretilin yang lain memukul kami dengan potongan kayu dan senjata di punggung saya. Mereka memukul kami sama semua, baik anggota Apodeti atau UDT.

Kami ditahan di sana selama [empat] bulan dan selama itu kami terus dipukuli. Tetapi kami memperoleh cukup minuman dan kami makan tiga kali sehari termasuk daging kerbau dan buncis merah.¹³⁹

158. Komisi juga mendengar tentang bagaimana tahanan dari distrik Viqueque dibawa ke Baucau dan ditahan di “sebuah ruang toilet kecil” (lihat bagian mengenai Viqueque, paragraf 167 – 169, di bawah).¹⁴⁰

Lautém

159. Terdapat relatif sedikit peristiwa penahanan di Distrik Lautém. Masyarakat di distrik tersebut menceritakan tentang tingkat kekerasan yang berbeda-beda yang terjadi di sana. Contohnya, di Desa Mehara (Tutuala, Lautém), yang merupakan desa berafiliasi ke Fretilin, keadaan kembali normal ketika Fretilin mengambilalih kendali.* Desa-desa yang lain melaporkan bahwa warganya yang mendukung UDT ada yang ditangkap, akan tetapi mereka ditangkap di Dili, karena mereka pergi ke sana untuk ambil bagian dalam pertempuran.¹⁴¹

160. Fretilin mengambil alih markas *Companhia Caçadores* 14, yang sebelumnya dipakai UDT untuk menahan tahanan dari Fretilin dan di sana mereka memenjarakan baik tahanan anggota UDT maupun Apodeti. Edmundo da Conceição Silva, pemimpin Apodeti di Subdistrik Moro, menuturkan kepada Komisi bahwa sejumlah tahanan berada di markas *Companhia* selama enam bulan.¹⁴² Tahanan lainnya dibawa ke Dili oleh Fretilin, termasuk Sersan Carçeres, Sinanis, Morão, dan lainnya.¹⁴³

161. Sejumlah tahanan di Lautém dilaporkan mengalami penganiayaan. Masyarakat Bauro melaporkan bahwa warganya yang bersimpati pada UDT, antara lain Pedro Amaral dan Serafin dos Santos Pinto, ditangkap oleh Fretilin. Mereka dipukuli dengan hebat dan dipaksa bekerja di sawah.¹⁴⁴

162. Para tahanan di Lospalos melarikan diri setelah serangan militer Indonesia pada awal 1976.

Liquiçá

163. Pusat penahanan Fretilin di Distrik Liquiçá terdapat di Desa Leotela dan Desa Leorema (Bazartete), markas Fretilin di Fatumetafu (Maubara) dan di Belavista, Desa Gugleur (Maubara).¹⁴⁵ Beberapa bekas tahanan dari tempat ini mengatakan bahwa mereka dianiaya, dipukuli, ditelanjangi, dan dipaksa tidur di atas pasir selama lima hari sampai terluka dan memar.

164. Contoh lainnya seperti Cosme da Silva Afonso dari Desa Gugleur (Maubara), yang memberi kesaksian tentang penangkapannya pada Agustus 1975, oleh seorang komandan Fretilin dan pasukannya, karena ia seorang komandan UDT. Ia mengatakan bahwa mereka menyita 30 ekor sapi serta beberapa karung beras dan membawanya ke Nunupouubu di Desa Gugleur, di mana ia diinterogasi sebelum dilepas. Tak lama setelah itu, dua komandan Fretilin dan pasukannya menangkapnya lagi, membawanya ke Basis 2 di Kakaegoa di Desa Leotela, dan menahannya selama

* Profil Komunitas CAVR di Desa Mehara (Tutuala, Lautém), 27 November 2002. Penduduk Barikafa juga melaporkan berada dalam keadaan damai pada 1975 (Profil Komunitas CAVR di Desa Rasa, Luro, Lautém, 9 September 2003).

tujuh hari. Ia ditahan di dalam lubang yang dalamnya sekitar empat meter dan setiap hari hanya diberi sepotong ubi kayu untuk makan. Selama hari-hari itu, ia dipaksa memikul kayu dan mengumpulkan air. Ia mengatakan bahwa setelah satu minggu, ia dipindahkan ke pusat penahanan di Cailaco (Bobonaro) dan ditahan selama tiga bulan berikutnya. Akhirnya ia dibawa ke Nunulisa di Desa Gugleuri dan selama semalam ditahan dalam sebuah lubang. Ia tidak melaporkan adanya penyiksaan fisik yang dialaminya selama penahanan.¹⁴⁶

165. Marcos Borges, seorang anggota UDT yang telah bertempur melawan Fretilin di Dili, bercerita kepada Komisi mengenai penahannya pada September 1975. Dia telah melarikan diri dari Dili menuju Distrik Ermera dengan sekelompok anggota UDT, termasuk pemimpin-pemimpin seperti João Carrascalão dan João Bosco. Marcos Borges berkata bahwa setelah dia ditangkap oleh Fretilin, dia dipukuli habis-habisan dan kemudian para penangkapnya mencoba membunuh dia dengan sebuah golok dan tombak. Dia ditahan di Leorema selama dua malam.¹⁴⁷

166. Cecilio dos Santos menuturkan kepada Komisi bahwa ia menjaga radio di basis Fretilin, tetapi para komandan mencurigainya sebagai mata-mata. Mereka membawanya ke markas Fretilin di Fatumetafu di mana ia dipukul bertubi-tubi dengan cambuk dari kulit kerbau.¹⁴⁸

Viqueque

167. Augusto Ximenes menceritakan bagaimana komandan Fretilin Nicolau Lobato memimpin reaksi bersenjata Fretilin di distrik Viqueque. Ia mengatakan bahwa seorang komandan Fretilin, T115, menangkap para pemimpin UDT termasuk Mateus Soares, António Pinto, Domingos Sousa, Domingos Lekiloik, dan sekitar 20 anggota UDT yang lain di Carau-Balu (Viqueque, Viqueque).¹⁴⁹

168. Sejumlah tahanan dari Viqueque mungkin telah dibawa ke Manatuto dan banyak tahanan dibawa ke penjara di Baucau.* Di antara mereka termasuk pemimpin Partai Apodeti dan Trabalhista. Paulo Freitas, presiden Partai Trabalhista, ditangkap di rumahnya di Ossu. Ia mengatakan kepada Komisi:

Tiba-tiba kami mendengar telah ada kudeta tandingan...Pasukan Fretilin datang, menangkap dan mengirim kami ke penjara... Chiquito Osório dan Jaime yang sekarang sudah meninggal, yang dulu adalah administrator Viqueque. Pasukan (Apodeti) mereka berasal Laclubar...Dua-duanya lari ke Ossu dan datang untuk bersembunyi di rumah saya...Dan kemudian datang Fretilin menangkap kami. Malam harinya mereka membawa tiga-tiga kami ke penjara.

169. Paulo Freitas menjelaskan, bagaimana mereka bertiga dibawa ke Baucau oleh pasukan Fretilin dan ditahan dengan orang lain dalam kelompok-kelompok lima atau enam tahanan, masing-masing ditempatkan di dalam kakus kecil. Ia menuturkan

* Pernyataan HRVD 6502 menyebutkan Domingos Soares di Manatuto.

bahwa tahanan yang ditempatkan di kamar ini di Baucau dibawa dari Ossu (Viqueque), Baucau, Quelicai, dan Laga (semuanya subdistrik di Baucau).¹⁵⁰

Manatuto

170. Komisi memperoleh bukti bahwa Fretilin menahan anggota UDT dan Apodeti di seluruh Distrik Manatuto selama reaksi bersenjata Fretilin terhadap gerakan bersenjata UDT itu, termasuk di markas Fretilin di Manatuto, di Desa Leikala (Laclo, Manatuto), di Welihumetan (Laclo, Manatuto), Markas Fretilin di Soibada, dan di Konte Tatoli (Manatuto, Manatuto).¹⁵¹

171. Pernyataan-pernyataan dari Manatuto menunjukkan bahwa tahanan yang ditempatkan di distrik itu tidak dianiaya secara fisik, tetapi umumnya dijadikan pekerja paksa. Markas Fretilin terletak di Manatuto Kota. Sebastião Almeida mengatakan kepada Komisi bahwa ia ditahan di sana pada 1975 karena dicurigai sebagai anggota UDT. Diceritakannya bahwa ia melihat banyak tahanan di sana tapi hanya mengenal João Baptista Braz, Luis Pereira, dan Domingos Sousa. Mereka ditahan sampai militer Indonesia melakukan invasi di Manatuto pada awal 1976, kemudian dia kabur bersama Falintil. Menurut pengakuannya ia tidak dianiaya, tetapi harus bekerja setiap hari membajak tanah.¹⁵²

172. Subdistrik Laclo adalah tempat terjadinya pertempuran sengit antara Fretilin dan UDT pada awal September 1975, yang menyebabkan lebih banyak orang terbunuh daripada yang ditahan. Manuel Nunes Soares, seorang anggota UDT di Laclo, mengatakan kepada Komisi bahwa di akhir Agustus ia mendengar pasukan Fretilin di Remexio (Aileu) akan datang untuk menangkap dia dan anggota UDT lain, yaitu Pascoal Bernardo. Kedua orang tersebut melarikan diri, namun semua harta miliknya termasuk ternaknya diambil oleh anggota Fretilin. Manuel Nunes Soares mengatakan, pada 5 September, setelah sejumlah pembunuhan terjadi di tempat itu, Pascoal Bernardo melapor ke pos Fretilin di Fatu Butik (Laclo, Manatuto), dan kemudian ia ditangkap. Manuel mengatakan, dua hari kemudian Pascoal dibunuh. Manuel Nunes Soares ditangkap bersama seorang komandan Fretilin pada 12 Oktober dan ditahan di tempat mencuci pakaian di Laclo sampai 28 Oktober oleh komandan Fretilin T117. Selama penahanan ia dipukuli dan ditendangi.¹⁵³

Bobonaro

173. Di beberapa wilayah Bobonaro, seperti di Desa Lourba (Bobonaro, Bobonaro), masyarakat melaporkan bahwa tidak terjadi konflik partai di sana. Sampai September, Fretilin sibuk mempertahankan desa-desa dari serangan militer Indonesia.¹⁵⁴

174. Meski demikian, Komisi mendapat laporan mengenai pusat penahanan di tengah kota Bobonaro, tempat sejumlah orang ditahan setelah ditangkap di berbagai tempat di distrik itu. Seorang anggota UDT melaporkan, ia ditangkap oleh seorang anggota Fretilin, T121, di Ritabou (Maliana, Bobonaro). Ia mengatakan, T121 menghantamnya

dengan senapan Mauser, mengikatnya dengan tali, kemudian membawanya ke Subdistrik Bobonaro, tempat ia ditahan selama dua bulan. Dikatakannya bahwa ia baru dilepas setelah militer Indonesia melakukan invasi.¹⁵⁵

175. Seorang kapten di *Segunda Linha*, yang juga anggota pasukan UDT, ditangkap oleh Fretilin di Subdistrik Cailaco (Bobonaro), saat ia mencoba pergi dari Ermera ke Timor bagian Barat selama September. Ia dibawa ke Bobonaro dan ditahan selama dua malam, sebelum dikembalikan ke Distrik Ermera.¹⁵⁶

176. Sejumlah penangkapan juga terjadi di Subdistrik Lolotoe. Joana Afonso melaporkan penangkapan suaminya, João Pereira, ketika Fretilin menyerang Lolotoe Kota. Ia mengatakan anggota Fretilin membawa suaminya ke kantor desa di Lontas (Lolotoe) dan kemudian ia tidak kembali lagi.¹⁵⁷ Mariano Leite memberi kesaksian bahwa pada 1975 (bulan tidak diketahui), pamannya, Rafael Maria dan dua orang paman temannya, yaitu Geraldo Pereira dan Mariano dari Lolotoe, ditangkap oleh Fretilin karena dicurigai menjadi mata-mata UDT. Ia mengatakan, tentara Fretilin membawa mereka ke Mapeo di Desa Sibuni (Lolotoe), di sana mereka diikat dan dipukul. Dua prajurit Fretilin memotong telinga kanan Rafael Maria. Ia mengatakan, Fretilin menyekap tiga orang tahanan di pos komando Manil Molop (Lolotoe, Bobonaro) dan memaksa mereka memasak dan menyajikan makanan bagi pasukan Fretilin selama hampir satu tahun.¹⁵⁸

177. Armania Borges menuturkan kepada Komisi tentang saudaranya, Santano Berlelo, dan putranya sendiri, Angelino Botu-Mail, yang ditangkap di rumah mereka dan dibawa ke Desa Genulai. Hanya Angelino yang kembali karena melarikan diri dari penahanan.¹⁵⁹

178. Pusat penahanan Fretilin lainnya di Distrik Bobonaro meliputi Penjara Maliana, di dalam kantor desa di Desa Lontas (Lolotoe), Tapp-Dirihun (Atabae), dan pos komando di Manil Molop (Lolotoe).¹⁶⁰

Masa pemerintahan Fretilin

179. Sejak akhir September 1975, Fretilin telah menguasai wilayah Timor-Leste dan mulai menjalankan pemerintahan, sementara terus mengupayakan kembalinya pemerintahan kolonial Portugis dari Pulau Ataúro. Banyak pemimpin dan pendukung UDT melarikan diri ke Indonesia. Fretilin menahan anggota UDT yang ditangkapnya selama dalam pertempuran dan terus menangkap para penentangannya. Mulai awal Oktober, Apodeti juga menjadi sasaran penangkapan Fretilin di Dili. Pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penganiayaan dan penyiksaan, terus berlanjut. Anggota Fretilin yang ditangkap karena dicurigai melakukan kegiatan mata-mata ataupun pelanggaran lain juga ditahan.

180. Meskipun demikian, Mari Alkatiri menuturkan kepada Komisi bahwa Fretilin merasa prihatin dengan kesejahteraan para tahanan. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa Komite Sentral membentuk komite khusus untuk memperhatikan keadaan orang-orang yang ditahan di penjara-penjara Fretilin. Ia menegaskan, Fretilin

memberi akses penuh kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) ke penjara-penjara dan bahwa Fretilin mulai membebaskan orang dari penjara sejak awal Oktober.¹⁶¹

Penahanan lanjutan terhadap pendukung UDT

181. Begitu menguasai Timor-Leste, Fretilin melanjutkan penangkapan dan penahanan terhadap lawan-lawan politiknya. Sejumlah contoh dari periode ini:

- Anacleto do Nascimento menuturkan mengenai penangkapannya di Desa Matai (Maukatar, Covalima) pada 14 Oktober 1975 oleh anggota Fretilin T801, T802, T803, T804, dan T805, karena ia adalah anggota UDT. Ia diikat ke sebuah tiang kayu selama semalam dan pagi berikutnya ia dibawa ke kantor Fretilin di Matai dan di sana dadanya dihantam dengan popor senapan dan ditusuk. Tulang-tulanginya patah dan ia muntah darah. Ia ditahan di sana selama tiga bulan.¹⁶²
- Sejumlah bekas tahanan Fretilin di Distrik Manatuto melaporkan telah mengalami penganiayaan. Misalnya, Saturnino Sarmento yang mengaku sebagai warga masyarakat sipil (yang tidak memiliki afiliasi), menuturkan tentang dirinya dan anak-anaknya, Cristiano, Oscar, dan Armindo, yang ditahan di Leikala (Laclo, Manatuto) pada 1975 (bulan tidak diketahui) oleh anggota Fretilin bernama T806, atas perintah komandan Fretilin T807. Korban-korban dibawa ke Leikala langsung setelah ditangkap dan diinterogasi. Tangan mereka diikat dan mereka dipukuli dengan batang pohon asam. Fretilin menahan mereka selama dua bulan dan selama itu setiap malam hari tangan mereka diikat erat satu sama lain dan siang hari mereka dipaksa menebang pohon sagu dan membawa mereka kembali ke Leikala.¹⁶³
- Komisi mendapat laporan dari Rubi Metan bahwa pada Oktober 1975, ia dan istrinya, Biliba, putra mereka, António, dan adik-adiknya, Masanak dan Mahare (yang mengaku sebagai warga masyarakat sipil tanpa afiliasi), ditangkap dan dibawa ke Konte Tatoli di Iliheu (Manatuto, Manatuto). Selama dalam tahanan, Rubi Metan dipukuli dengan kayu oleh T808, T809, T810, T811, dan T812 secara bergantian selama satu jam. Akhirnya, Biliba, António, dan Masanak dikirim ke Remexio di Aileu dan tidak pernah kembali. Mahare ditusuk dengan pisau di ulu hatinya oleh T812 sehingga tewas. Rubi Metan ditahan selama dua tahun lebih dengan tahanan lainnya yang anggota Fretilin, termasuk Sico Loi dan João Manrui. Mereka dipaksa bekerja setiap hari, seperti di sawah atau menebang pohon sagu.¹⁶⁴

182. Komisi memperoleh laporan dari seorang anggota UDT yang ditangkap setelah ia kembali dari Timor Barat, tempat ia mengungsi selama konflik internal itu. Rafael de Araújo memberi kesaksian bahwa ia kembali ke rumahnya di Desa Ritabou (Maliana, Bobonaro) pada akhir 1975. Ia ditahan oleh prajurit Fretilin, antara lain T121, dan dipukuli dengan senapan, lantas diikat dan dibawa ke Bobonaro Kota (Bobonaro, Bobonaro) dan ditahan di sana selama dua bulan. Ia dibebaskan ketika pasukan Indonesia memasuki Bobonaro.¹⁶⁵

Penahanan pendukung dan anggota Apodeti

183. Selama periode konflik bersenjata internal, pemimpin Fretilin menjadikan anggota dan simpatisan Partai Apodeti sebagai sasaran seperti juga UDT. Misalnya, kelompok-kelompok anggota Apodeti ditahan di Baucau pada 20 Agustus,¹⁶⁶ di Manufahi pada 27 Agustus,¹⁶⁷ dan di Lautém pada September 1975.¹⁶⁸

184. Pada 4 Oktober, operasi militer Indonesia di wilayah barat semakin meningkat. Fretilin melancarkan penahanan massal terhadap anggota dan simpatisan Apodeti di seluruh wilayah.¹⁶⁹ Di antara orang-orang yang ditahan tersebut terdapat Presiden Partai Apodeti, Arnaldo de Araújo, dan Sekretaris Jenderal José Osório Soares.¹⁷⁰ Mari Alkatiri bersaksi kepada CAVR bahwa ia memerintahkan penahanan tersebut setelah mengetahui adanya rencana kudeta oleh Apodeti untuk menggulingkan Fretilin.¹⁷¹

185. Distrik Oecussi relatif tenang selama Gerakan Bersenjata UDT, meskipun menurut keterangan para saksi, ketegangan antarpolitis telah dimulai sejak awal 1975.¹⁷² Setelah reaksi bersenjata Fretilin dan dengan meningkatnya serangan oleh Indonesia di wilayah bagian barat, bentrokan antara Fretilin dan Apodeti mulai terjadi. Misalnya pada 1975 (bulan tak diketahui), di Tumin yang terletak di Desa Bobometo (Oesilo), Francisco Enas Tebbes seorang pendukung Apodeti, ditahan oleh pasukan Fretilin yang dipimpin oleh T118. Ia diikat dan kemudian dipukuli habis-habisan, kemudian dibawa ke Oesilo tempat ia ditahan sementara sebelum dipindahkan ke Oecussi Kota dan ditahan selama tiga hari. Francisco Enas Tebbes mengatakan, selama di penahanan ia diancam oleh T119, seorang prajurit Fretilin, dan mengatakan bahwa ia terus diikat dan tidak diberi makan. Ia mengatakan telah mengalami penganiayaan fisik terus-menerus oleh dua anggota Fretilin. Ia berhasil melarikan diri sebentar, namun segera tertangkap kembali dan ditahan lagi untuk beberapa hari sebelum kemudian dibebaskan.¹⁷³

186. Arnaldo Sombiko juga menggambarkan terjadinya ketegangan serupa di Subdistrik Pante Makassar di Oecussi pada 1975 (bulan tak diketahui). Ia bercerita mengenai empat anggota Apodeti, masing-masing bernama António Lalus Sila, Oki Neno, Lelan Coi, dan Cobo Coi yang tertangkap di Desa Costa oleh Fretilin, dibawa ke Desa Naimeko. Mereka ditahan selama satu bulan dan dipaksa memotong rumput setiap hari.¹⁷³

187. Penahanan pendukung Apodeti lainnya yang dilaporkan kepada CAVR antara lain:

- Carolino Bere dari Samara (Hatolia, Ermera) menuturkan bagaimana ia bergabung dengan Apodeti pada Agustus 1975 kemudian ditahan oleh Fretilin pada November 1975, dan disekap selama tujuh bulan bersama sekitar 70 orang lainnya di Penjara Hatolia. Ia dibebaskan setelah keluarganya berjanji akan membawa babi, telur, dan kambing.¹⁷⁴

* Pernyataan HRVD 9058. Bobometo merupakan tempat pembunuhan massal para pendukung Apodeti oleh Fretilin pada 1975 (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

- José Soares bersaksi bahwa pada Desember 1975, waktu menjadi anggota Apodeti, ia berada di Maubisse (Ainaro) ketika pasukan Fretilin pimpinan T120 menyerang dan menahan 150 orang. Mereka ditempatkan di gudang kopi kosong di Desa Aitule (Maubessi, Ainaro). Di sana mereka dipukuli dengan kayu dan senapan, dan dipaksa membangun jalan. Menurut laporannya, mereka tidak diberi makan atau minum.¹⁷⁵

188. Di Dili, sejumlah kecil anggota Apodeti ditahan di Markas QG di Taibessi.^{*} Banyak lainnya ditahan di Comarca dan Fretilin juga mengambilalih Museum pada 4 Oktober 1975, khusus untuk menahan para tahanan Apodeti. Menurut Luis António de Aquino Caldas, di antara para tahanan di Museum tersebut terdapat Fernando José Osório Soares, Sekretaris Jenderal Apodeti, yang tertangkap bersama tujuh anaknya di dekat pantai Areia Branca ketika ia kembali dari piknik.¹⁷⁶ Frederico Almeida Santos, juga anggota Apodeti yang ditahan oleh Fretilin, mengenang kejadian tersebut:

Pertama kali kami dibawa ke museum, pintu masih terkunci dan dibuka oleh T83. Kami disuruh masuk ke dalam, kemudian mereka menangkap lagi orang-orang.¹⁷⁷

189. Komisi menerima kesaksian yang menyebutkan empat orang lainnya yang ditahan di Museum oleh Fretilin yakni Armando Suriano, António dos Santos, José dos Santos, dan Assis dos Santos. Keempatnya tetap ditahan setelah Indonesia melakukan invasi, kecuali José dos Santos yang sakit dan kemudian dibebaskan.[†]

Perpindahan tahanan antara pusat-pusat penahanan

190. Dalam periode ini para tahanan juga dipindah-pindahkan antara berbagai tempat penahanan atau dibebaskan. Pemandahan terjadi ketika Fretilin membawa pemimpin senior UDT ke penjara utama di Dili atau Aileu, atau pada waktu belakangan, ketika Fretilin mundur dari serbuan pasukan Indonesia. Fretilin memindahkan para tahanan dari Ermera, Viqueque, dan Maubisse ke Aileu.[‡]

* Misalnya, Abilio Amaral bersaksi bahwa ia tadinya anggota Apodeti dan ditangkap di Dili pada 6 Oktober 1975 oleh van Polisi Militer (*Unimog*) di Alfandega/Pelabuhan (Dili). Ia dibawa ke QG dan di tengah jalan salah satu prajurit itu menendang dan memukul perutnya dengan senapan, hingga ia berdarah di seujur tubuh. Ketika mereka tiba di penjara, Rogério Lobato memerintahkan para prajurit itu untuk berhenti melakukan pemukulan. (Pernyataan HRVD 3361.)

† Pernyataan HRVD 5073 ialah sebuah kesaksian bahwa setelah José dos Santos dibebaskan oleh Fretilin, pada 8 Desember, sehari setelah invasi ABRI di Dili, José dan dua orang lainnya, Manuel Febu dan Duarte dos Santos, tewas dibunuh oleh ABRI di Matadouro (Dili). Yang menjadi saksi pembunuhan adalah Liberatu dos Reis.

‡ Pernyataan HRVD 2222, di mana Eduardo Mau Leto menggambarkan bagaimana pasukan Fretilin dari Maubisse menahan penduduk sipil dari Desa Tokoluli, Labudo, dan Raegoa di Distrik Ermera. Para tahanan diikat berpasang-pasangan tetapi kemudian dibebaskan, kecuali tujuh orang, yang merupakan anggota UDT dan Apodeti, yang kemudian ditahan di Aileu. Ketujuh orang tersebut akhirnya dibawa ke Same oleh Fretilin dan empat dari mereka tak pernah kembali.

191. Komisi mendengar bahwa para tahanan di penjara subdistrik di Same dipindahkan ke Aileu pada awal Oktober, meskipun alasan pemindahan ini tidak jelas.¹⁷⁸ Bento Reis seorang tahanan dari Same yang dipindahkan ke Aileu. Ia menuturkan kepada Komisi:

Kami yang dibawa dari Same ke Aileu, ketika tiba di Aileu, pasukan Fretilin dan masyarakat sudah menunggu kami. Kami diturunkan satu per satu dari mobil. Di kanan-kiri jalan orang-orang dengan kayu dan alat-alat lainnya. Dan ketika kami turun dari mobil, mereka memukul hingga ada yang jatuh, ada yang kepalanya pecah, ada yang terluka dan cedera. Dipukul mulai dari jalan yang dilalui sampai ke tempat tahanan....Kami langsung dibawa ke gudang. Kami melihat banyak orang yang sudah berada di sana. Pada saat itu kami dipukul semua, tapi yang paling parah adalah Mayor Lourenço [Tilman] dan saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dan Senhor Monis da Maia, mereka ini yang dipukul paling parah. Pagi harinya baru mengeluarkan orang yang terluka dan dibawa ke rumah sakit untuk diobati.¹⁷⁹

192. Komisi mendengar kesaksian bahwa tahanan dari UDT dan Apodeti dari Same (Manufahi) mengalami penganiayaan fisik ketika dipindahkan ke tempat penahanan di Aileu. Penganiayaan ini berlanjut di Aileu. Monis da Maia, seorang pendukung UDT dari Same, mengatakan kepada Komisi:

Pada 9 Oktober, kami pergi ke Aileu. Ketika kami tiba di Maubisse [Ainaro], kami dibariskan di lapangan dan dipukuli satu demi satu dengan sepotong kayu. Setelah setiap orang dipukuli kami meneruskan perjalanan ke Aileu. Ketika kami tiba di Aileu kami dipukuli di sana oleh penduduk setempat.¹⁸⁰

193. João da Costa juga dipindahkan dari Same ke Aileu dan menuturkan kepada Komisi bahwa selama dalam perjalanan ia menderita perlakuan yang sama:

Sebulan [ditahan] di Same, mereka [Fretilin] menyuruh kami ke Aileu. Keluar dari Same, di setiap pos, mobil selalu berhenti agar para tahanan dipukul. Satu pos ke pos lain selalu dipukul. Sampai di Maubisse kami masuk ke asrama militer...mereka kemudian ke atas mobil dan memukul kami. Ada yang sampai pingsan. Setelah itu, ada yang bilang, "Jangan memukul di atas mobil, bawa turun, baru dipukul." Para tahanan kemudian disuruh berbaris dan membentuk tiga baris, lalu satu per satu disuruh masuk. Masing-masing tahanan dipukul satu per satu dengan kayu balok.

Kemudian komandan Soares tiba. Orang ini baik. "Kita ini manusia berdosa di dunia ini, Tuhan yang tidak berdosa masih mengampuni kita manusia yang berdosa, mengapa kita manusia berdosa tidak saling mengampuni?" Tidak terjadi lagi pemukulan. Namun kemudian

mereka melanjutkan perjalanan ke Aileu. Dalam perjalanan mereka mengharuskan merebahkan badan dan tidak boleh mengangkat kepala, karena mulai dari Maubisse hingga Aileu, anak-anak memamah di setiap jalan yang dilalui para tahanan. Di setiap pos mobil tetap berhenti untuk memukul para tahanan. Setiba di Aileu, mobil langsung berhenti di depan gudang, sebelah rumah sakit. Satu per satu turun dari mobil dan dipukul. Pada saat diturunkan dari mobil, pemukulan terhadap para tahanan tak terhitung lagi, baik dengan kayu balok, besi. Dan yang paling terasa sakit adalah tali rem mobil. Kalau besi dan paku sudah tak terasa sakit lagi karena sudah terbiasa. Yang paling sakit adalah tali rem itu. Yang ini sangat sakit!

Baru turun dari mobil bukan satu atau dua orang saja yang memukul. Setelah dipukul saya jatuh ke tanah. Kemudian disusul Carlito Ferreira, ia jatuh tepat di atas saya dan pingsan. Lalu kemudian kakak saya yang tertua mengangkat kami berdua untuk berdiri, tapi napas kami berdua terasa mulai terputus-putus. Dua orang lagi kemudian lari ke arah saya dan menghajar saya lagi. Saya duduk saja karena napas hampir terputus. Kami kira-kira berjumlah 30 orang lebih [yang dibawa dari Same]. Malam hari itu tahanan tinggal di penjara dan tiap malam tahanan dikeluarkan. Tapi kami yang dibawa dari Same tidak satu pun yang mati di Aileu.¹⁸¹

Kehidupan di Aissirimou

Aissirimou, di Distrik Aileu yang merupakan daerah pergunungan di Timor-Leste bagian tengah, adalah tempat Fretilin mendirikan markasnya setelah UDT melancarkan pergerakan 11 Agustus, dan dari sanalah Fretilin melancarkan pemberontakan bersenjata pada 19 Agustus 1975. Di tempat itu juga terdapat pusat-pusat penahanan terbesar milik Fretilin. Pusat-pusat penahanan itu semula hanya digunakan untuk menampung para tahanan dari Aileu; tetapi tak lama kemudian para tahanan lain, dari Manufahi dan Ainaro, juga dibawa ke Aissirimou. Para pemimpin ditahan di bangunan bekas barak-barak militer Portugis dan tahanan-tahanan yang lain di gudang kopi. Awal Desember, ketika Indonesia menginvasi Dili, para tahanan yang ditahan Fretilin di Markas QG di Taibessi juga dibawa ke Aissirimou.

Kondisi di Aissirimou

Penjara-penjara mulai penuh ketika para tahanan dari wilayah lain dibawa ke Aileu. Jumlah orang yang ditahan di Aissirimou sulit diperkirakan. Clementino Araújo, mantan penjaga di markas

besar Fretilin, berkata bahwa pada Agustus 1975 terdapat 200 orang tahanan.¹⁸² Seorang mantan tahanan menuturkan kepada Komisi bahwa menjelang Desember ada sekitar 3.000 orang yang ditahan di sana.¹⁸³ Eufrazia de Jesus Soares mengunjungi suaminya, Daniel Carvalho, sekretaris daerah Apodeti di Ermera yang dipenjara di gudang. Ia menuturkan kepada Komisi:

*Tempat tahanan itu adalah sebuah gudang. Orang-orang yang ada dalam tahanan itu sangat banyak, hingga tidak bisa duduk lagi, layaknya “ikan sarden dalam kaleng”, semuanya berdiri saja. Sampai di sana pun orang tidak kasih saya masuk. Dia pun mencari jalan agar kami dapat berbicara. Jadi saya berbicara dengan suami saya hanya lewat jendela saja.*¹⁸⁴

Gudang tersebut tidak dirancang untuk menampung orang dalam jumlah besar. Karena tidak ada fasilitas kakus, para penjaga harus menyediakan wadah-wadah besar untuk digunakan sebagai jamban. Seorang mantan tahanan, José Maukabae, bercerita tentang penjara itu.

*Ada beberapa drum di tengah-tengah kami. Buang air besar-kecil semua dilakukan pada drum itu. Pada pagi hari para tahanan berebutan untuk mengangkat drum itu keluar agar bisa melihat dan merasakan sinar matahari sambil membasuh tangan dan muka dengan air.*¹⁸⁵

Beberapa mantan tahanan berkata bahwa para penjaga memberi mereka sarapan dan makan siang, tapi tidak memberi makan malam. Untuk sarapan para tahanan makan nasi dan untuk makan siang mereka makan jagung.¹⁸⁶ Lainnya mengatakan bahwa para penjaga memukuli para tahanan setiap kali mereka datang mengambil makanan. Salah seorang mantan tahanan, João da Costa, menuturkan kepada Komisi:

*Tiap hari jika mau makan selalu dipukul. Banyak yang takut menerima makanan karena takut dipukul. Setelah menerima makanan, kamu harus hati-hati agar makanan itu tidak tumpah akibat dipukul. Banyak yang lapar karena takut menerima makanan.**

* Wawancara CAVR dengan João da Costa, Letefoho-Same, Manufahi, 24 Juni 2003. João da Costa ditahan di penjara subdistrik Same. Pada Oktober 1975, ia dipindahkan ke Aileu bersama sejumlah tahanan lain. Pada 27 Desember 1975, ketika ABRI mendekati Aileu, Fretilin memindahkan João dan tahanan-tahanan lainnya ke Maubisse dan kemudian ke Same. Pada 27 Januari 1976, ketika ABRI memasuki Betano, Fretilin memindahkan João dan para tahanan lainnya ke Holarua. Fretilin mengeksekusi beberapa tahanan di Holarua kemudian memindahkan João dengan sekitar 40 tahanan lain ke Same dan menahan mereka di sekolah dasar, tempat banyak tahanan dibantai. João dan tiga tahanan lain lolos dari pembantaian itu (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

Kerja Paksa

Untuk menyediakan makanan bagi para tahanan, Fretilin memaksa para tahanan bekerja di sawah-sawah atau kebun-kebun kopi sebagai bagian dari *Campo de Trabalho* (Kamp Kerja).¹⁸⁷ Tahanan lelaki menggarap sawah dan tahanan perempuan menebah padi dan memasak untuk prajurit Falintil.¹⁸⁸ Fretilin sepertinya menyadari bahwa pekerjaan seperti ini merupakan kerja paksa, tetapi menganggap bahwa cara ini memang perlu untuk menyediakan makanan bagi para tahanan. Presiden Fretilin Francisco Xavier do Amaral, menjelaskan kepada Komisi:¹⁸⁹

Saya kira paksaan itu ada, tetapi kita mau kasih makan mereka, kita mau ambil makanan dari mana? Kita harus melihat situasi di mana kita berada. Kita tidak ada makanan, tidak ada logistik, tidak ada yang membantu kita, sehingga bagaimana kita bisa menghidupkan mereka. Ya sudah, mereka tahanan bekerja buat mereka dan juga buat kita sendiri, itulah peraturan yang kita pakai secara wajarlah... campo de trabalho adalah satu kebijakan, atau satu kegiatan darurat yang dilaksanakan Fretilin untuk menghidupi rakyat.

Akan tetapi makanan tetap sulit didapat. António Serpa, yang dibawa oleh Fretilin ke Aileu setelah invasi pada 7 Desember ke Dili, menuturkan kepada Komisi:

Karena situasi ini kami sangat menderita karena makanan. Jika kami ingin mengambil makanan kami akan dibawa dan dibunuh... Pada akhirnya mereka yang sangat kelaparan pergi untuk mengambil makanan; tetapi kami juga takut...Akhirnya pada tanggal 15 Desember saya dipilih untuk dibawa dan dibunuh. Saya dibawa dan ditaruh bersama kelompok Aileu. Di tempat itu lebih dari 60 orang dalam satu ruangan kecil...Mereka tidak memberi kami makanan. Saat kami dikurung dalam gudang mereka memberi kami makanan, tetapi di dalam ruangan ini mereka tidak memberi kami apapun untuk dimakan.¹⁹⁰

Ia akhirnya dibebaskan dari ruangan itu dan selamat.

Penyiksaan dan penganiayaan di Aissirimou

Komisi juga mendengar orang-orang disiksa dan mengalami berbagai bentuk perlakuan kejam dan tidak manusiawi lainnya di Aissirimou. João da Costa menggambarkan penyiksaan terhadap Mayor Lourenço Tilman, seorang mantan mayor di Segunda Linha dan komandan UDT di Same (Manufahi):

Mayor Lorenço, saat pertama tiba di Aileu, dia yang dianiaya paling berat, karena dia adalah komandan. Mereka mengeluarkan dia dan menaruhnya di atas atap mobil sambil berkeliling di Kota Aileu dan

berteriak “Viva Fretilin”. Ia sempat ditusuk dan darahnya mengucur. Mukanya sudah babak belur dan bicara pun tak bisa lagi.”¹⁹¹

Anggota Fretilin dan masyarakat Aileu ikut serta dalam penganiayaan terhadap para tahanan ini. Monis da Maia menuturkan kepada Komisi bahwa “bukan tentara, tapi masyarakatlah yang memukuli kami.”¹⁹²

Pengadilan para tahanan Fretilin*

194. Ketika para pemimpin Fretilin menyadari kesewenang-wenangan penahanan tersebut dan tempat-tempat penahanan Fretilin mulai penuh sesak, mereka menciptakan jalan untuk melepaskan dan membebaskan orang-orang yang tak bersalah. Pemerintahan kolonial Portugis tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali dari Ataúro, sehingga tidak ada dalam posisi untuk bisa menangani situasi ini. Pada 30 September, Fretilin mengumumkan dibentuknya komisi yang akan menyelidiki latar belakang para tahanan. Di banyak wilayah, komisi ini terlambat melakukan tugasnya, jauh setelah pelanggaran hak asasi manusia terhadap para tahanan dimulai. Komisi ini tidak aktif di seluruh wilayah. Memang, berbagai pernyataan yang diterima oleh Komisi menunjukkan bahwa jumlah tahanan terus meningkat dan anggota-anggota Fretilin di distrik-distrik, secara individu, mulai membuat keputusan dan mengambil tindakan terhadap para tahanan atas inisiatif sendiri.

195. Salah satu contoh dari tindakan tersebut adalah munculnya “pengadilan” bagi para tahanan di beberapa wilayah. Pengadilan ini merupakan bentuk pengadilan rakyat yang disebut dengan ‘*justiça popular*’. Dalam pengadilan seperti ini, seorang tahanan dibawa ke hadapan masyarakat yang berkumpul dan mengeluarkan putusan bersama apakah ia harus dihukum atau tidak.

196. Pengadilan rakyat ini tidak memiliki norma-norma prosedural dan tidak menghormati hak asasi si terdakwa. Putusan yang diambil bersifat sewenang-wenang dan sering atas dasar sentimen dan amarah. Bahaya terjadinya pelanggaran hak-hak terdakwa dalam proses ini semakin tinggi dalam iklim ketegangan yang terus terjadi dan kemarahan merebak di antara korban-korban perang saudara. Orang-orang yang tidak terlibat dalam gerakan bersenjata tetap dihukum dan diganjar dengan pemukulan dan pemenjaraan.

197. Luis Godinho, seorang anggota UDT dari Lospalos, setelah peradilan rakyat dijatuhi hukuman cambuk sampai mati di hadapan banyak orang dengan menggunakan cambuk berduri.¹⁹³ Rekan Luis Godinho sesama tahanan, yaitu Edmundo da Conceição, menuturkan kepada Komisi tentang “pengadilan” yang menyebabkan matinya Luis Godinho:

.....
* Komisi mencatat bahwa proses pengadilan yang dimaksudkan di dalam laporan ini bukanlah sistem pengadilan formal, melainkan beberapa praktik yang digunakan oleh anggota Fretilin selama periode ini untuk meraih setidaknya sebagian keadilan untuk para tahanan dan pelaku kejahatan.

Pada saat itu Justiça Popular atau Pengadilan Rakyat dilaksanakan di dua tempat. Pertama, mereka melaksanakan di markas Companhia Caçadores 14, setelah [para tahanan] dipukul semua, dibawa ke kantor administrasi Lospalos. Kami semua tahanan dibawa pergi ke sana. Sampai di sana setelah naikan bendera, terjadi lagi tindakan pemukulan yang menyebabkan Luis Godinho mati di bawah tiang bendera. Dipukul sampai mati. Di depan kantor sekretariat, diselenggarakan Justiça Popular baru dipukul sampai mati. Dipukul dengan rusan pahano [semacam cambuk berduri] sampai mati di depan mata kami.*

Yang memukul Luis Godinho itu banyak orang, sulit untuk mengatakan siapa saja. Tapi seorang anggota Fretilin, T122, yang memukul duluan, kemudian anggota Fretilin, T123, lalu menyusul semua orang turut memukul. Jadi kita tidak tahu siapa saja yang memukul, semua orang memukul.

Setelah korban dipukul sampai mati, mereka taruh mayatnya di atas traktor dan membawanya pergi untuk dikubur. Ini di hadapan kami.¹⁹⁴

198. Dua pernyataan yang disampaikan kepada Komisi, menggambarkan “sidang pengadilan rakyat” di Poetete (Ermera) pada 25 September 1975. Menurut Filomena dos Santos, dua prajurit Fretilin pergi ke penjara Ermera dan memanggil ayahnya, Kapten Miguel Martins dari *Segunda Linha* dan seorang prajurit UDT, yang telah dipenjarakan selama satu minggu. Miguel Martins dibawa keluar ke hadapan publik dan disidang. T124 berkata kepada orang-orang desa yang berkumpul itu: “Kalau Anda menjawab pergi ke Aileu, artinya ia akan hidup. Kalau Anda bilang tinggal di Ermera, artinya ia akan mati.” Mayoritas masyarakat berteriak: “Tinggal di Ermera!” Filomena mencatat bahwa di antara kerumunan orang tersebut terdapat para perempuan yang suaminya telah dibunuh oleh UDT beberapa minggu sebelumnya. Miguel Martins kemudian ditembak dan tewas.¹⁹⁵

199. Contoh pengadilan rakyat lain di Ermera juga diceritakan kepada Komisi. Angelina Barros mengatakan kepada Komisi bagaimana, di Fatubessi (Hatolia, Ermera) pada September 1975, seorang komandan Fretilin dari Aileu, José Soares, dan anakbuahnya mengejar sekelompok anggota UDT sampai ke Bobonaro. Di sana mereka menangkap komandan kelompok UDT tersebut, Serafin dos Santos, dan 11 anakbuahnya. Mereka dibawa kembali ke Fatubessi. Ke-12 anggota UDT itu dibawa menghadap ke pengadilan rakyat. Orang-orang ditanya apakah ke-12 anggota UDT tersebut harus hidup atau mati. Jawaban dari orang-orang adalah bahwa mereka harus mati. Akhirnya mereka dibawa ke komando Fretilin di Fatubessi dan ditahan. Dia tidak mengatakan kepada Komisi tentang nasib 12 orang tersebut.¹⁹⁶

* *Rusan pahano* adalah bahasa Fataluko dipakai di sekitar Distrik Lautém. Sulit menemukan padanan yang sesuai untuk kata tersebut baik dalam bahasa Tetum atau Indonesia. Tetapi, alat tersebut berpaku-paku.

Setelah invasi besar-besaran Indonesia

200. Komisi mendengar bahwa di sebagian besar distrik di Timor-Leste, termasuk di Bobonaro, Covalima, Baucau, Lautém, dan Manatuto, para tahanan Fretilin dibebaskan setelah militer Indonesia masuk ke daerah-daerah tersebut. João Viena Freitas menuturkan kepada Komisi bahwa di Baucau, 160 tahanan yang ditahan di *Descascadeira* di Kota Baucau dievakuasi ke Venilale ketika Indonesia menginvasi. Mereka menginap di sekolah Venilale semalam dan kemudian disuruh menjaga diri sendiri. Banyak dari mereka menyerah kepada marinir Indonesia di Baucau.¹⁹⁷

201. Sebagian tahanan di Baucau telah dibawa pulang oleh Fretilin ke subdistrik asal mereka sebelum pasukan Indonesia menyerang Baucau dan dibebaskan di sana. Paulo Freitas, Presiden Trabalhista pada waktu itu dan merupakan tahanan Fretilin, telah dibawa dari Baucau ke Uatolari (Viqueque):

Saat tentara Indonesia datang dan melakukan invasi, saya kira mereka [Fretilin] akan membunuh saya dan kami dalam bahaya besar. Invasi itu disiarkan melalui radio dan anak-anak yang membawa makanan untuk kita memberi tahu bahwa Indonesia akan menyerang. Semuanya terjadi sangat cepat. Kemudian mereka [Fretilin] bilang kepada kami: "Kalian boleh pulang sekarang karena kami akan lari ke hutan". Mereka bilang penduduk di kota akan dibunuh [oleh ABRI] tetapi yang di hutan akan selamat, jadi lebih baik saya lari ke hutan.¹⁹⁸

202. Para tahanan di pusat penahanan besar di Dili dan Aileu dipindahkan bersama pemimpin Fretilin ketika mereka lari ke selatan.

203. Pada pertengahan Oktober, ABRI dan pasukan pembantu Timor-Lestinya menduduki Maliana dan garis depan terus bergeser ke timur. Pada 3 atau 4 Desember, Fretilin memindahkan anggota Apodeti yang ditahan di Museum di Dili ke *Quarter Geral* di Taibessi, untuk bergabung dengan tahanan UDT.* Ketika militer Indonesia menginvasi Dili pada 7 Desember, Fretilin membawa tahananannya di *Quartel Geral* di Dili ke Aileu.¹⁹⁹ Xanana Gusmão menjelaskan dalam kesaksiannya:

Para tahanan UDT dan Apodeti dibawa ke bukit-bukit bukan dengan maksud dibunuh...tetapi pasukan terjun payung sedang mendarat...pasukan Indonesia sedang menduduki Dili, [mereka] terus naik dan naik.²⁰⁰

204. Dalam perjalanan tersebut, Fretilin memaksa tahananannya membawa kotak-kotak amunisi. Seorang anggota UDT, José Maukabaé, menuturkan kepada Komisi:

* Wawancara CAVR dengan Luis António de Aquino Caldas, Palapaço, 21 Mei 2004. Filomeno Pedro Cabral Fernandes bersaksi bahwa pada 4 atau 5 Desember, Fretilin memindahkan tahananannya di Museum ke QG, Taibessi, dan mereka ditahan sampai 7 Desember.

Pada pagi hari 7 Desember, kami tidak makan lagi. Siapa yang mempunyai makanan sendiri yang bisa makan. Sampai siang hari, Nicolau Lobato ke QG. Dia berdiri di depan pintu tempat tahanan dan meminta kepada kami dalam bahasa Portugis, “Teman-teman seperjuangan, kalian ingin hidup, atau mati?” Jadi kami menjawab: “Kami, Komandan, ingin hidup.”

[Dia menjawab] “[Kalau] kenyataannya kalian ingin hidup, kalian punya waktu tiga menit untuk berbaris dan menolong mengangkut peralatan ini ke pergunungan dan kemudian kalian harus kembali ke sini. Jangan membawa barang milik pribadi. Barang pribadi ditinggal di sini. Kalian hanya akan ke gudang amunisi dan menolong membawa peralatan ke gunung lalu kembali. Kalau kalian tidak mau menolong, semua orang akan mati. Hukum perang menyatakan hal ini. Selama pasukan bersenjata mengalami kesulitan, tawanan perang harus menolong pasukan. Apabila kalian tidak menolong pasukan, semua orang mati.

Lalu kami menjawab: “Komandan, kami mau menolong...sampai kematian kami.” Lalu, dalam waktu tiga menit kami semua keluar untuk menolong mengangkut peralatan ke pergunungan.²⁰¹

205. Yang lain mengatakan bahwa ketika militer Indonesia menyerang Dili, terjadi perdebatan sengit antara para pemimpin Fretilin mengenai nasib para tahanan di *Quarter Geral*. António Ximenes Serpa menuturkan kepada Komisi:

Pada tanggal 7 Desember, burung [pasukan terjun Indonesia] turun dari langit. Kami betul-betul dalam bahaya. Ada diskusi besar antara para pemimpin mengenai apakah mereka akan membunuh kami, membiarkan kami hidup, atau dibiarkan untuk menyelamatkan diri sendiri. Mereka mengadakan diskusi besar. Kemudian pada akhirnya Nicolau Lobato meyakinkan mereka, berkata, “Jika kamu mau bunuh mereka, kamu harus pikul sendiri kotak peluru-peluru yang ada gudang amunisi.” Kata-kata ini akhirnya meredakan emosi mereka. Maka mereka bawa kami pukul satu untuk ambil kotak-kotak peluru lalu berangkat ke Aileu.²⁰²

206. Tahanan di Comarca berhasil melarikan diri dan berjalan menuju Konsulat Indonesia di Lecidere, Dili.

Pelarian dari Comarca Balide, 7 Desember 1975: Anselmo dos Santos dan Frederico Almeida Santos²⁰³

Anselmo dos Santos

Pada suatu hari kami mendekati Arnaldo [Araújo, Presiden Apodeti] dan dia membisiki kami: “Jangan putus asa, kawan. Tidak akan lama lagi kita akan keluar dari sini.” Minggu pagi, sekitar pukul 04.00, 7 Desember, kami mendengar suara pesawat udara dan melihat prajurit Indonesia telah mendarat dengan menggunakan parasut. Mereka belum sampai di tanah ketika terjadi tembakan dari bawah. Pintu-pintu penjara tertutup rapat dan tak seorangpun keluar.

Frederico Almeida Santos

Kami melihat terjun payung. Kami mengawasi apa yang akan terjadi. Kami tidak tahu, apakah harus lari keluar atau tinggal saja di dalam. Saya memanggil Filomeno Gomes [sipir penjara] dan berkata: “Kawan, biasanya ketika perang berkecamuk dan rumah-rumah dibakar, orang-orang yang berada dalam tahanan tak akan dapat keluar—Anda harus membebaskan kami agar kami dapat mencari jalan keluar.”

Anselmo dos Santos

Awalnya [para penjaga] tetap berada di atas atap sambil menembakkan senjata mereka, tetapi Presiden Arnaldo menyarankan kepada mereka: “Kawan, akan lebih baik jika kalian menanggalkan seragam tentara kalian dan menyembunyikan senjata kalian. Jika ada yang datang dan bertanya, kami akan katakan bahwa kita semua adalah tahanan.” Lima orang Fretilin itu akhirnya mengikuti sarannya, menyembunyikan senjata, dan menanggalkan seragam mereka.

Frederico Almeida Santos

Orang-orang saling menembak dan kami menyusun kasur-kasur agar dapat menjangkau jendela dan melihat keluar. João Branco [seorang komandan Falintil] dan tiga lainnya lewat di depan kami ketika mereka sedang dalam baku tembak dengan ABRI. Siang harinya, mereka kembali lewat dan melihat kami semua di jendela. João berkata: “Apa lagi yang kalian tunggu? Sekarang telah terjadi perang besar. Kami tidak peduli lagi pada kalian,” kemudian ia pergi.

Anselmo dos Santos

Setelah pasukan Fretilin [di sebelah penjara Balide] mulai mundur ke QG, kami bersiap-siap pergi. Tepat pada saat kami akan keluar dari penjara, Arnaldo mengeluarkan sarung bantal putih dan

mengikatkannya di tiang besi, lalu menempatkan tiang besi itu di depan penjara. Tak seorang pun dari kami yang tertembak. Kami semua keluar dari penjara.

Ketika kami akan pergi, seorang prajurit ABRI dan parasutnya jatuh tepat di depan dapur penjara. Dia telah tewas. Arnaldo menyuruh kami untuk mengangkat tubuh prajurit tersebut dan meletakkannya di atas meja. Arnaldo memeriksa tubuh prajurit itu dan mengambil kartu tanda penduduk dan sebuah rosario dari kantongnya—mungkin dia orang Katolik. Kartu tanda penduduk dan rosario itu kemudian diletakkan di sebelah jenazah. Senapan dan mortirnya disandarkan di tembok dekat kepala prajurit itu. Setelah itu Arnaldo pergi. Presiden Arnaldo, *malae* Albano itu, dan seorang Arab—ketiganya memimpin perjalanan sambil mengibarkan kain putih...Kami mengikuti di belakang mereka menuju Konsulat Indonesia di Lecidere.

Pemindahan tahanan dari Dili ke Aileu dan kemudian ke Same

207. Pada 27 Desember 1975, ketika militer Indonesia bergerak maju ke Aileu dan pesawat-pesawat menggempur kota,²⁰⁴ Fretilin kembali mengevakuasi para tahanan, mula-mula ke Maubisse (Maubisse, Ainaro) dan kemudian ke Same (Manufahi). Komisi menemukan bahwa pembunuhan massal terhadap tahanan terjadi baik di Aileu sebelum perjalanan paksa dimulai dan di Maubisse ketika dalam perjalanan (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Tahanan yang tersisa sampai di Same pada 31 Desember. Mantan Presiden Fretilin Francisco Xavier do Amaral, menjelaskan alasan dilakukannya perpindahan tersebut:

Kami di tengah-tengah kecamuk perang, dalam perang ini, ketika kami lari dari musuh-musuh kami...kami membawa mereka yang telah kami penjarakan, musuh-musuh kami yang telah kami penjarakan, ikut bersama kami. Sebelum kami sempat mengatur napas, kami berkata: "Apa yang kita lakukan sekarang? Kita harus terus berlari. Kita tidak punya banyak pilihan. Tidak ada angkutan, tidak ada makanan, obat-obatan tak cukup, tak ada apapun." Beberapa orang yang kami penjarakan telah sakit parah, banyak yang kondisinya sangat lemah.

Jadi kami harus melihat semua kondisi ini. Apakah kami lari sendiri saja dan membiarkan mereka? Atau kami bunuh mereka dan kemudian melarikan diri? Saya melihat bahaya dalam kedua-duanya. Jika mereka dibiarkan, misalnya mereka anggota UDT atau Apodeti, mereka bisa jatuh ke tangan musuh Indonesia. Militer Indonesia bisa saja datang dan dia dapat jatuh ke tangan mereka. Indonesia akan menekan mereka dan berhasil menemukan kami. Tentara Indonesia bisa saja menekan mereka lalu menemukan kami. Mereka dapat menipunya dan membuatnya mengaku.²⁰⁵

208. José Maukabe mengenang perpindahan dari Aileu:

*Pagi-pagi pesawat sudah membom kota Aileu, mungkin karena ABRI sudah mengetahui lokasi tempat tahanan jadi pada saat itu pesawat hanya membom lokasi di samping-samping tempat tahanan. Di luar tempat tahanan terus terdengar bunyi senjata tapi kita harus bagaimana, pintu tempat tahanan tertutup rapat, tidak bisa keluar. Tak lama kemudian pesawat membom tepat mengena sebuah rumah di sebelah jalan, air sampai keluar. Mereka mengeluarkan kami untuk dievakuasi.**

209. António Serpa, tahanan lain dari Aissirimou, menggambarkan sulitnya perjalanan ke Same melalui Maubisse:

Hari hujan ketika kami meninggalkan Aileu menuju Maubisse. Kami belum makan selama tiga atau empat hari. Tangan-tangan kami lelah. Kami berdiri tidak bisa tegak. Kami berjalan pelan-pelan menuju Daisoli di mana kami kemudian menginap. Mereka yang berencana untuk melarikan diri tidak bisa melakukannya karena tidak punya cukup tenaga.

Kemudian pada pagi hari tanggal 28 Desember kami melanjutkan perjalanan ke Maubisse. Tanggal 28 Desember malam kami tidur di Maubisse. Keesokan harinya, pagi-pagi kami meninggalkan Maubisse untuk mengambil amunisi dan membawanya ke Same. Ada seorang teman yang tidak mampu membawanya. Dia membuangnya begitu saja. Kemudian Nicolau Lobato berkata: "Sekarang saya sudah hilang kesabaran. Siapa yang membuang amunisi itu? Kamu semua harus tetap di sini."

Kami semua merasa malu. Mereka yang paling kuat mengambil amunisi itu dan membawanya. Ketika meninggalkan Maubisse turun hujan. Tetapi sebelum kami sampai di Fleixa, teman saya João Damas, yang kelelahan, pingsan. Sampai hari ini saya tidak tahu apakah dia kemudian mati atau tidak. Kami berjalan pelan-pelan membawa amunisi ke Fleixa. Kami semua berhenti di sana. Hujan turun lebat.

Kemudian kami meneruskan perjalanan. Kami sangat lapar. Kami duduk di bawah sebuah rumah panggung. Saya bertanya kepada teman-teman, "Siapa yang siap untuk mati?" Saya merasa tidak kuat lagi. Saya menyarankan untuk menunggu Perdana Menteri [Nicolau Lobato] untuk bertanya apakah kita bisa berhenti dan tetap di situ.

* Wawancara CAVR dengan José Maukabe, Maubara, Liquiçá, 9 Maret 2004. José Maukabe menyebut dua kelompok tahanan di Same, kelompok pertama (*premeiro grupos*) dan kedua (*segundo grupos*). Ia termasuk yang kedua, yang dikenal dengan nama kelompok Maubere. Laporan lain menyebut tiga kelompok di Same: *Grupos de Maubere*, *Grupos de Semi Perigoso*, dan *Grupos de Perigosissimo* (wawancara CAVR dengan Filomeno Pedro Cabral Fernandes, Dili, 5 Mei 2004; Assis dos Santos, Dili, 17 Juli 2003; Monis da Maia, Dili, 5 Desember 2003; Bento Reis, Same, 2004).

Mereka bisa membunuh kami di sana. Saya tidak tahan lagi. Maka kami semua menunggu...Perdana Menteri pun tiba dengan para pengawalinya. Saya berkata kepada Perdana Menteri bahwa kami datang dari Aileu dan selama ini belum makan dan tidak kuat lagi untuk membawa amunisi tersebut. Saya mengatakan kami tidak bisa melakukannya dan jika saja dia tidak mempercayai kami dia bisa saja langsung membunuh kami.

Maka semua amunisi pun disimpan di Fleixa. Tiga mobil datang untuk membawa amunisi ke Maubisse dan tiga mobil itu kembali membawa ubi. Kami menginap di sebuah tempat bernama Fahi Teen. Kemudian pada pagi hari tanggal 30 kami meninggalkan tempat itu dan pergi ke Same.²⁰⁶

210. Para tahanan tiba di Same sekitar 31 Desember 1975 dan menghabiskan malam tahun baru di sana. Menurut António Serpa, pada 10 Januari mereka melihat kilatan cahaya ke arah laut dan Fretilin curiga para tahanan memberikan sinyal pada pihak militer Indonesia. Fretilin memerintahkan para tahanan berkumpul di tiga ruang besar di dalam Sekolah Dasar Same. José Maukabae menggambarkan apa yang terjadi:

Sekolah dasar itu mempunyai tiga ruangan, saya dan José Osório masuk ke dalam ruangan yang tengah. Dia duduk di tengah. Dia mengatakan, "Sekarang saya bicara tidak bisa lagi karena posisi saya sudah terjepit (tamba hau iha klot ona). Di Dili Arnaldo yang di sana. Saya tidak tahu dia sedang berbuat apa. Karena partai saya ini tidak ingin perang. Saya meminta integrasi ke Indonesia tapi tidak dengan perang. Jadi, sekarang ini Indonesia datang untuk mencari perang (mai para buka funu), dia cari saja musuh dia yang di mana-mana, silakan cari, tapi orang-orang saya tidak akan mau bekerjasama (kolabora) dengan mereka. Tapi sekarang saya bicara tidak bisa lagi. Arnaldo yang di sana, saya tidak tahu, Indonesia datang itu, dia [Arnaldo] bicara apa dengan mereka."²⁰⁷

211. Pada 12 Januari 1976 Fretilin membagi tahanan menjadi tiga kelompok: *Grupo de Maubere* (Kelompok Maubere), *Grupo de Semi Perigoso* (Kelompok Semi-Berbahaya), dan *Grupo Perigosissimo* (Kelompok Berbahaya).²⁰⁸ *Grupo de Maubere* terdiri atas para simpatisan partai-partai oposisi yang tidak memiliki kekuasaan politik. Fretilin menahan mereka di rumah Mateus Ferreira. *Grupo de Semi Perigoso* merupakan para anggota dan pendukung partai oposisi yang memiliki pengaruh tapi kecil. Fretilin menempatkan mereka di sekolah dasar yang sama di Same. *Grupos de Perigosissimo* terdiri atas para pemimpin dan pengurus partai oposisi yang dianggap berbahaya oleh Fretilin. Fretilin menahan mereka di penjara subdistrik.²⁰⁹

.....
* Mateus Ferreira adalah pemimpin UDT di Same.

Hola Rua (Same, Manufahi)

212. Ketika ABRI memasuki Desa Betano (Subdistrik Same di pantai selatan Manufahi) Fretilin berjuang mempertahankan kendali. Sulit bagi pemimpin partai untuk mengatur para tahanan. Pada 27 Januari 1976 Fretilin mengevakuasi para tahanan dari kota Same ke Desa Hola Rua (Same, Manufahi).²¹⁰ Di sana, Fretilin menahan sebagian besar tahanan di bangunan sekolah dasar lainnya, tetapi beberapa orang tahanan termasuk José Fernando Osório Soares, Sekretaris Jenderal Apodeti, ditahan di rumah Mayor Segunda Linha Lourenço.²¹¹ Tahanan yang ditempatkan di Hola Rua meliputi mereka dari *Perigosísimo* (Kelompok Berbahaya) dan *Semi-Perigoso* (Kelompok Semi Berbahaya). Komisi mendengar kesaksian tentang dua kelompok tahanan yang dieksekusi oleh Fretilin. Monis Da Maia menuturkan kepada Komisi tentang kelompok pertama, yang di dalamnya termasuk Sekretaris Jenderal Apodeti José Osório Soares, di Hat Nipah dekat Hola Rua, pada 27 Januari 1976.²¹²

213. Komisi diberitahu tentang eksekusi terhadap kelompok kedua yang lebih besar, di Sekolah Dasar Same. Di tempat itu Fretilin mengeksekusi 44 tahanan UDT pada 29 Januari 1976 (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

214. Sebagian besar tahanan dari *Grupo de Maubere* (Kelompok Maubere), kecuali anggota Apodeti, dibebaskan pada 31 Januari. José Maukabae menggambarkan apa yang terjadi pada para tahanan:

Selain sejumlah tahanan yang telah dieksekusi Fretilin, sebagian besar tahanan juga dibebaskan. Seperti 20 orang tahanan dari Apodeti dan UDT yang dibebaskan oleh komandan pasukan Fretilin, Paulino Gama dan Guido, di Hola Rua (Same, Manufahi) pada akhir Januari 1976. Dan para tahanan yang di kelompok kedua atau segundo grupos, kecuali pengikut Apodeti, orang-orang UDT, Fretilin dan non-partai semuanya dibebaskan oleh Cesar Maulaka di Hola Rua pada akhir Januari 1976.²¹³ Sedangkan para pengikut Apodeti dipisahkan dari tahanan lain dan dimasukkan ke dalam sebuah sekolah dasar di Hola Rua, kemudian dibawa keluar pada malam hari ke Mota Karau Ulun, Hola Rua, dan dieksekusi mati dengan cara ditombak.²¹⁴

215. Filomeno Pedro Cabral Fernandes dan Assis dos Santos membenarkan pembebasan tahanan pertama, yakni 20 tahanan UDT dan Apodeti, oleh Fretilin.²¹⁵ Filomeno Cabral menyatakan bahwa para komandan Fretilin Guido Soares, Paulino Gama (Mauk Moruk), António Pinto (Kalohan), dan Moises Quina meminta agar para tahanan dibawa keluar dari Hola Rua. Mereka menandatangani kesepakatan dengan Fretilin dan kemudian dibawa ke timur oleh pasukan Falintil dan dibebaskan di sana. Assis dos Santos mengatakan tentang kesepakatan yang ditandatangani oleh 20 tahanan di Kiras (Same, Manufahi) sebelum pembebasan mereka:

Kami melakukan perjanjian dengan Fretilin. Banyak yang hidup. Perjanjiannya adalah kami harus melakukan sumpah darah, kami harus bergabung dan memperkuat kekuatan Fretilin. Kami jangan mengkhianati perjanjian yang telah dibuat; jika kami mengkhianati perjanjian itu, kami akan mati.²¹⁶

216. José Maukabaé menceritakan dengan terperinci apa yang terjadi ketika César Maulaka memutuskan nasib kelompok tahanan kedua di Hola Rua:

[César Maulaka] berkata: “Kalian tahanan di sini, banyak yang dari UDT, orang-orang Fretilin juga ditahan karena berkelahi dan mencuri, orang-orang Apodeti dan juga mereka yang tidak terlibat dalam partai juga jadi tahanan. Jadi, saya menghitung dalam saya menit saja, siapa yang UDT, siapa yang Apodeti, siapa yang Fretilin, dan siapa yang tidak ikut partai. Berdiri di sini, baris berkelompok.” Kami masing-masing tahanan melakukan introspeksi (exame de consciência) pada dirinya sendiri. Jadi tidak lama kemudian, lihat satu kelompok sudah terbagi dalam empat kelompok. Dan yang dari Maubara (Liquiçá) saya bergabung dengan UDT, empat orang lain [teman José dari Maubara] ke kelompok-kelompok lain. Kemudian komandan Cesar Maulaka mengatakan, “Sekarang kalian milisi bawa para camarada Apodeti ke gedung sekolah yang di bawah dan besok sesudah diadili baru masing-masing pulang ke rumah mereka.” Pada saat orang-orang Apodeti itu semuanya dibawa pergi, Cesar Maulaka berkata lagi, “Sekarang kalian UDT, Fretilin, dan kalian yang tidak ikut salah satu partai, bagi siapa yang punya teman di Same kalian boleh tinggal bersama mereka dan jika besok-lusa negeri ini sudah aman, kalian boleh pulang ke daerah kalian, sedangkan yang tidak punya teman di sini kalian boleh pulang ke daerah kalian.” Semua bergembira dan berteriak. Saat itu sudah sekitar jam 6 atau jam 7 malam.²¹⁷

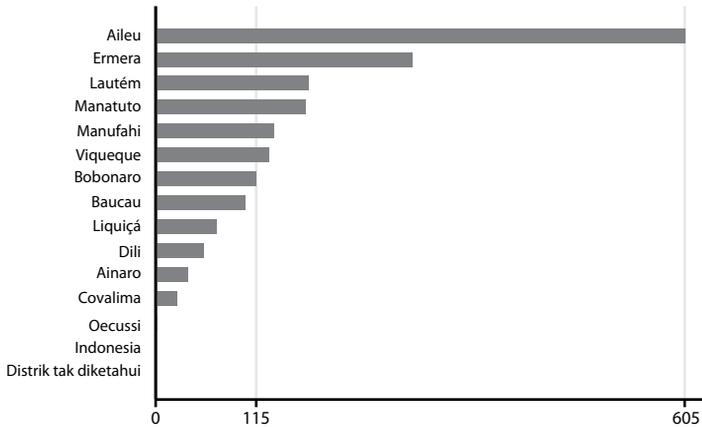
Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh Fretilin (1976-79)

217. Setelah invasi Indonesia dan sebelum penghancuran basis-basis Resistansi pada akhir 1978, Fretilin/Falintil terus menahan orang di daerah-daerah yang dikuasainya (zona bebas, *zonas libertadas*), berdasarkan cara hukumnya sendiri. Namun tidak seperti 1975, yang menjadi korban penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh Fretilin adalah anggota partainya sendiri atau warga sipil yang tinggal di daerah-daerah ini.

218. Untuk pelanggaran berat atau pelanggaran berulang-ulang, tahanan ditempatkan di pusat-pusat penahanan biasa atau di Kamp Rehabilitasi Nasional (Campo de Reabilitação Nacional, atau *Renal*). Perbedaan antara *Renal* dan pusat penahanan biasa Fretilin secara teori sangat jelas. *Renal* ditujukan untuk menegakkan disiplin bagi anggota Fretilin atau warga sipil, “yang perlu dikembalikan ke jalan yang benar” melalui pengajaran asas-asas ideologi Fretilin. Selain melibatkan rakyat dalam proses produksi dengan bekerja di ladang-ladang komunal, *Renal* ini juga memberikan pendidikan politik dan terkadang pelatihan baca tulis. Namun dalam praktik, perbedaannya tidak selalu jelas. Di benak warga sipil, *Renal* tak ubahnya sama dengan penahanan dan memang kenyataannya banyak *Renal* yang diubah menjadi tempat tahanan. Selain itu, Komisi juga memperoleh informasi mengenai banyaknya penyiksaan dan penganiayaan tahanan yang terjadi di *Renal*.

219. Selama Konferensi Soibada, yang diadakan dari 15 Mei hingga 2 Juni 1976, pengurus Fretilin memutuskan bahwa kawasan-kawasan yang dikuasai oleh Fretilin akan dibagi menjadi enam sektor yang dikendalikan oleh komando militer dan kawasan administrasi politik di bawah kendali pejabat pemerintahan Fretilin. Kawasan tersebut meliputi: Ujung Timur (Ponta Leste), yang meliputi Distrik Lautém; Tengah Timur (Centro Leste), yang meliputi Distrik Baucau dan Viqueque; Tengah Utara (Central Norte), meliputi Distrik Manatuto, Aileu, dan Dili; Tengah Selatan (Centro Sul) meliputi Manufahi dan Ainaro; Wilayah Perbatasan Utara (Fronteira Norte) meliputi Liquiçá, Ermera, dan sebagian Bobonaro; dan Wilayah Perbatasan Selatan (Fronteira Sul), meliputi Covalima dan sebagian Bobonaro. Komisi juga memperoleh informasi bahwa pusat penahanan termasuk *Renal* dibuka di setiap sektor Fretilin di Timor-Leste. Data statistik Komisi mencatat bahwa penahanan dengan frekuensi terbanyak terjadi di Distrik Ermera, yang jumlah laporannya sangat jauh di atas yang lain, diikuti oleh Manufahi, Aileu, dan Viqueque. Distrik Bobonaro, Oecussi, dan Ainaro tidak melaporkan adanya penahanan seperti itu, sedangkan di Distrik Dili, Lautém, dan Covalima angka penahanan tergolong rendah. Hasil-hasil ini tidak mencerminkan dalam segala hal semua temuan penelitian kualitatif yang dilakukan Komisi yang, misalnya, menyebutkan bahwa jumlah tahanan di Lautém termasuk tinggi.

Bagan jumlah tindakan penahanan yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil terhadap anggota Fretilin/Falintil, berdasarkan distrik, 1974-1979



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

220. Korelasi antara penyiksaan dan penahanan sangat tinggi, dan hal ini penting. Dari 49 kasus penahanan anggota Fretilin/Falintil oleh Fretilin/Falintil yang dilaporkan terjadi di Distrik Ermera, juga dilaporkan terjadi 49 kali penyiksaan, yang mengindikasikan bahwa penyiksaan bisa jadi merupakan aspek yang biasa dalam penahanan anggotanya sendiri oleh Fretilin/Falintil selama periode ini.

221. Bagian ini membahas praktik-praktik yang diadopsi oleh Fretilin untuk meraih keadilan sampai derajat tertentu dan juga membahas alasan-alasan penahanan warga sipil dan anggota Fretilin/Falintil antara 1976 dan 1978, serta perlakuan atas orang yang ditahan oleh Fretilin secara umum. Berbagai pernyataan dan kesaksian yang disebutkan di bawah menggambarkan semua jenis pusat penahanan, tapi perhatian khusus diberikan untuk *Renal* karena sifatnya yang unik untuk periode ini dan merupakan bagian penting dari strategi Fretilin dalam hal revolusi sosial dan politik. Komisi mencatat bahwa perlakuan terhadap para tahanan berbeda dari sektor yang satu dengan sektor yang lain.

Keadilan di bawah Pemerintahan Fretilin

222. Praktik-praktik peradilan yang diadopsi oleh Fretilin dijelaskan secara terperinci dalam Bagian 5: Resistansi: Struktur dan strategi. Secara ringkas, praktik-praktik tersebut menciptakan perbedaan antara yang dianggapnya sebagai pelanggaran kecil, seperti kesalahan komandan yang menyebabkan kematian anggota pasukannya,²¹⁸ pelecehan terhadap kaum wanita (*book feto*), atau pencurian ayam dan pelanggaran berat, seperti mengkhianati “garis politik”, bangsa, atau revolusi.²¹⁹

223. Untuk pelanggaran yang lebih ringan, tertuduh akan dipanggil oleh Komisaris Politik' untuk menjalani proses kritik dan kritik-diri pada rapat umum. Dalam proses ini seorang pemimpin Fretilin akan menunjukkan kesalahan seseorang (kritik) dan kemudian orang tersebut akan menyatakan pemahaman dan penyesalannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi (*autocritica*/kritik diri). Terkadang, orang tersebut akan diminta untuk melakukan "tindakan perbaikan" yang sesuai (*justo correctivo*), seperti mengambil air atau kayu bakar selama waktu yang ditentukan. Hal ini dianggap sebagai bentuk rehabilitasi dari pihak pelaku.²²⁰

224. Untuk pelanggaran yang lebih berat, tertuduh akan melalui proses peradilan rakyat (*justiça popular*) di mana rakyat yang akan memutuskan nasib tertuduh. Dalam *justiça popular* tidak ada hakim ataupun jaksa. Komandan yang membuat tuduhan akan membawa tertuduh ke hadapan umum dan menyampaikan tuduhan serta alasan bagi dakwaannya kepada rakyat. Komisaris politik sendiri atau bersama Komandan Sektor akan mengambil putusan.²²¹ João Vianas menerangkan:

Bagian justicia adalah yang sebagai hakim yang memutuskan setiap perkara dan berdasarkan peraturan Fretilin. Melalui proses sidang, tertuduh akan menjawab pertanyaan mengenai kenapa ia ditangkap dan siapa memberi laporan, lalu sidang akan memanggil pemimpin-pemimpin seperti komisaris [politik]. Sampai saya ditanyakan: "Apakah Anda tahu kesalahan Anda?" Lalu saya menjawab: "Sampai sekarang saya tidak pernah tahu." Mereka menjawab: "Sekarang saya memberitahu bahwa kesalahan Anda adalah adik Anda, José dos Santos adalah seorang pengkhianat. Dan yang memberi informasi mengenai adalah temanmu."²²²

225. Tidak semua kasus berat diselidiki dan tidak ada praduga tak bersalah ataupun, dalam banyak kasus, hak jawab. Ada kasus di mana orang yang dituduh berencana menyerahkan diri [ke ABRI] hanya berdasarkan tuduhan dari komandan setempat dan putusan pun dibuat. Meskipun rakyat memiliki hak memutuskan, mereka biasanya mengikuti perintah komandan. Untuk alasan ini, Komisi menemukan bahwa bahkan bilamana praktik peradilan diikuti sebagaimana telah ditentukan, praktik tersebut menghasilkan penahanan yang bersifat sewenang-wenang. Seorang mantan *Assistente Politik* Komisariat Fretilin menuturkan kepada Komisi:

Peradilan rakyat ialah sesuatu yang formal. Bentuk yang diambil ialah: bayangkan bahwa saya ialah tertuduh yang bersalah dan kemudian saya dibawa menghadap masyarakat umum. Ketika saya menghadap mereka, banyak orang akan berkata bahwa saya bersalah; tidak akan ada yang membantah keputusan tersebut, walaupun saya telah melakukan hal yang benar. Tidak ada hakim untuk membela kami dan pada waktu itu bukanlah hakim maupun jaksa yang

* Komisaris politik (*Comissário Política*) adalah pemimpin tertinggi dalam sektor untuk segala hal yang berkaitan dengan administrasi politik atau militer (lihat Bagian 5: Resistansi: Struktur dan strategi).

menghadapkan tertuduh di depan umum. Saya pernah menyaksikan kurang lebih tiga kasus, untuk orang-orang yang dicurigai dan ditangkap di zona [perang] gerilya dan komandan menangkap dia atas tuduhan sebagai mata-mata. [Di pengadilan rakyat], komandan itu berkata: "Orang yang kami tangkap di zona gerilya ini mata-mata." Rakyat mengatakan, "Kalau dia mata-mata, dia harus mati." Kasus-kasus seperti ini biasanya yang menangani adalah komandan Falintil dan rakyat hanya mengikuti apa yang dia katakan.²²³

226. Jika seseorang telah menjalani proses kritik dan kritik-diri dan menyelesaikan tindakan *justo correctivo* tapi kemudian melakukannya lagi, ia akan ditahan di *Renal* atau penjara lainnya. Atau, *adjunto*^{*} dapat memutuskan mengirim pelaku ke *Renal* melalui persidangan *justiça popular*. Dalam kasus lain, seperti ditunjukkan oleh kutipan di atas, pelakunya dibunuh.

227. Seperti juga jenis kesalahan, lama masa pemenjaraan ditentukan oleh komisaris politik atau orang lain yang memiliki wewenang. Beberapa kriteria digunakan untuk memutuskan bila seseorang akan dibebaskan, termasuk perilaku tahanan selama dalam penahanan. Dalam beberapa kasus, digunakan suatu proses kuasi-peradilan, yang dijalankan oleh seksi pengadilan Fretilin.

Alasan penahanan

228. *Renal* didirikan untuk menahan anggota Fretilin dan Falintil dan warga sipil yang telah melanggar (atau dituduh melanggar) asas-asas dan ideologi Fretilin dan mengkhianati perjuangan. Di antara alasan-alasan yang paling umum untuk penahanan adalah:

- Pengkhianatan berupa rencana untuk menyerahkan diri kepada ABRI atau melakukan kontak dengan orang di daerah-daerah yang dikuasai ABRI, yang dibuktikan dengan melintasi batas yang ditetapkan oleh Fretilin²²⁴
- Akibat dari perpecahan politik internal
- Untuk menegakkan disiplin

Pengkhianatan karena berencana menyerahkan diri atau menghubungi orang-orang yang berada di kawasan yang dikuasai ABRI

229. Alasan paling umum untuk ditahan di *Renal* atau pusat penahanan Fretilin adalah melakukan pengkhianatan karena berhubungan dengan atau bekerja dengan musuh, yakni militer Indonesia (atau orang "di kota"), atau berencana menyerahkan

^{*} *Commissario Politica* (Komisaris Politik) menyediakan kepemimpinan politik dalam struktur Fretilin di tingkat sektor. *Adjunto* memainkan peran *Commissario Politica* di tingkat zona (lihat Bagian 5: Resistansi: Struktur dan strategi).

diri kepada musuh. Baik warga sipil maupun anggota Fretilin/Falintil akan ditangkap bila melakukan atau dicurigai melakukan tindak kejahatan ini. Bila ditangkap, mereka akan dibawa ke basis Fretilin untuk diinterogasi, ditahan, dan diadili.

230. Temuan bahwa seseorang telah melintasi batas zona atau *linha de fogo* (garis luar basis perlawanan Fretilin), di mana tentara bersenjata berada, sudah cukup menjadi alasan untuk mendukung tuduhan bahwa orang tersebut telah melakukan kontak dengan musuh.²²⁵ Seorang komandan dapat pula dituduh bekerjasama dengan musuh apabila tentara musuh berhasil memasuki daerah Fretilin dan membunuh orang. Dalam situasi seperti ini, komandan akan dianggap telah melakukan kesalahan berat²²⁶ dan ketika komandan diketahui telah melakukan kesalahan, anggota pasukannya juga akan ditahan atas tuduhan yang sama.²²⁷

231. Pedro Faria, komandan milisi Fretilin pada 1975 dan sekretaris Zona Sakalu, menuturkan kepada Komisi bahwa ia ditahan di sebuah *Renal* yang disebut Belta Trés di Irara (Fuiloro, Lospalos, Lautém):

*Saya masuk penjara Renal karena saya berencana untuk menyerah dan Komisariss Politik mendengar rencana saya tersebut. Saya ditangkap, kemudian diinvestigasi dan saya mengaku akan rencana. Kemudian saya ditahan selama 1,5 bulan. Selama di tahanan saya tidak sendirian, waktu itu banyak orang yang ditahan bersama saya.*²²⁸

232. Terkadang, melakukan kontak dengan seseorang yang dicurigai sebagai pengkhianat sudah menjadi alasan yang cukup bagi Fretilin untuk melakukan penahanan. Hal ini terjadi pada João Vianas pada November 1977. Ia ditangkap, diikat, dan ditahan selama seminggu. Selama masa ini, ia disiksa, tidak diberi makan nasi, dan dikencingi, meskipun ia tidak diberi tahu mengapa ia ditangkap. Setelah seminggu, ia dipanggil untuk menghadap kepala Sekretariat Zona:

*Saat giliran saya diinterogasi, mereka bertanya "Apa hubunganmu dengan José dos Santos?" José dos Santos adalah adik laki-laki saya, seorang Komandan Fretilin di daerah ini, yang telah dibunuh Fretilin. Saya tidak melakukan kesalahan apapun tetapi saya ditangkap karena kematian adik saya, José dos Santos. Mereka khawatir kalau-kalau saya pergi ke kota dan melaporkan hal ini kepada ABRI, tetapi saya tahu saya tidak melakukan kesalahan apapun.*²²⁹

233. Seperti ditunjukkan dalam pernyataan João Vianas, jika salah satu atau lebih anggota suatu keluarga ditangkap atas tuduhan bekerjasama dengan Indonesia atau berupaya menyerahkan diri, anggota keluarga yang lain bisa ditangkap juga. Hal ini khususnya terjadi jika salah satu atau lebih anggota keluarga tersebut adalah pemimpin Fretilin.

234. Domingos Soares Martins menuturkan kepada Komisi bahwa meskipun ia adalah anggota aktif Falintil ia dituduh menjadi mata-mata pada 1978 oleh Komandan Fretilin T131 di Leubasa (Ermera), karena ibunya baru saja menyerahkan diri kepada ABRI.²³⁰

235. Modesto de Jesus Almeida Sanches menuturkan kepada Komisi:

Pada November 1977 saya, ayah saya Salvador Almeida, dan Adelino Freitas ditangkap oleh satu peleton tentara Falintil di Aldeia Haksolok, Iliomar [Lautém], karena memiliki hubungan keluarga dengan Pedro Sanches, Gill Sanches, Bendito Savio, dan Adão Amaral yang lebih dulu ditangkap dan dipenjara di sektor Ujung Timur [Ponte Leste] bagian tengah.

Setelah ditangkap kami dimasukkan ke sebuah kandang babi selama tiga hari, tiga malam. Lalu tangan saya diikat ke belakang dan disuruh jalan kaki dari Iliomar ke penjara Besi Manas di Luro. Di Luro, Adjunto [Fretilin] T125 mengatakan kepada ke-49 tahanan, termasuk saya, kami adalah pengkhianat terhadap tanah air. Lalu, dengan tangan kami tetap diikat ke belakang di jari dan siku [dan kaki kami diikat di] lutut dan jari kaki, kami dimasukkan ke sebuah rumah di mana lantainya ada batu-batu kecil tajam. Kami diikat baik siang maupun malam.*

Setelah tiga bulan baru saya diinterogasi oleh sekretaris zona Luro, T126. Dia mengatakan saya ingin menyerahkan diri, tapi saya mengatakan karena semua kakak saya sudah kalian tangkap, maka saya pun ditangkap. Saya merasa tak melakukan kesalahan apa-apa.²³¹

236. Ketika militer Indonesia menyerang suatu daerah dan para pemimpin daerah tersebut memutuskan mundur, para tahanan tidak dibebaskan karena mereka dianggap pasti akan menyerahkan diri sehingga memungkinkan musuh menguasai daerah tersebut. Orlando Silva Correia Belo (Fernando So), bekas sekretaris desa di Zona Sakalu dan kemudian menjadi orang yang bertanggung jawab atas Renal Marabia di Iliomar, Lautém, menggambarkan penahanannya di sebuah 'kandang babi' pada 1976:

Pada Oktober 1976, saya, Pedro Nunes alias Sabelai, Julio Alegria, Victor Gandara, Caitano Vilanova, dan Manuel Gandara, bersama masyarakat sipil menghadiri sebuah pertemuan besar di Paição. Dalam pertemuan itu, pemimpin Fretilin seperti T127, T128, dan T129 menjelaskan masalah penyusupan militer Indonesia di Sacalo, Tutuala. Kami dianggap kurang bertanggung jawab dan diperintah meletakkan semua barang dan disuruh angkat tangan. Lalu pinggang kami diikat dengan tali saling menyambung dan dibawa ke sebuah kandang babi.

Setelah dipenjara di kandang babi selama sembilan bulan, baru kami diinterogasi oleh Adjunto T125, perihal penyusupan ABRI

.....
* Penjara-penjara "kandang babi" ini bukanlah bangunan yang pernah dipakai sebagai kandang babi, melainkan bangunan penjara seadanya, yang terkadang dalam hal bentuk dan ukuran mirip kandang babi. Nama "kandang babi" digunakan untuk merujuk kepada kenyataan bahwa para tahanan makan, tidur, dan buang air di dalam tempat itu seperti babi dalam kandangnya.

dan perebutan wilayah Tutuala. Saya menjawab tak tahu mengenai hal itu. Setelah itu kami 27 orang itu dibebaskan dan saya diangkat menjadi penanggung jawab Renal Marabia, Iliomar menggantikan posisi saudara Tito Cristovão da Costa (Lere Anan Timor).²³²

237. Memiliki hubungan apapun bentuknya dengan orang di kota akan dicurigai oleh Fretilin. Miguel da Silva menuturkan kepada Komisi bahwa pada 1976, ia ditangkap karena dituduh telah membawa makanan kepada keluarganya di Desa Laritame (Ossu, Viqueque).²³³

238. Luis da Costa adalah seorang pastor paroki saat Fretilin menangkapnya pada Mei 1976 dan sekali lagi pada November 1976. Ia dituduh telah berhubungan dengan orang-orang di kota dan juga dituduh tidak mendukung ideologi Fretilin karena perannya sebagai pastor Katolik.

Penahanan Padre Luis da Costa

Luis da Costa menjadi pastor pada April 1974 dan ditempatkan di Ossu (Viqueque). Sebagai pastor, ia tidak menjadi anggota suatu partai politik. Pada 1976, ketika ABRI memasuki daerah Ossu, Padre Luis melarikan diri ke hutan tetapi tetap menjalankan tugas kepastorannya. Ia mengadakan misa setiap Minggu, memberi sakramen baptis, dan mengajar orang banyak tentang agama Katolik. Padre Locatelli di Quelicai adalah penghubungnya untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk misa. Meski demikian, tugas keagamaan yang dilakukannya dikritik oleh sebagian anggota Fretilin dan ia pertama kali ditangkap pada April 1976:

Sekitar masa Paskah, pada bulan April 1976...mereka membawa saya ke Komando Sagadate yang terletak di salah satu aldeia dari Laga. Yang menjadi komandan pada waktu itu adalah Paulino Gama 'Mauk Moruk'...Abel Ximenes Larisina yang melakukan interogasi...Ia bertanya mengapa kami tidak menyanyikan lagu-lagu revolusioner? Saya bilang, "Ada waktu ketika kita harus menyanyikan lagu-lagu revolusioner, juga ada waktu kita harus menyanyikan lagu-lagu keagamaan, kita tidak boleh mencampuradukkan [keduanya]"... Kemudian pada hari kelima mereka membiarkan saya bebas bergerak ke mana saja untuk menjalankan kegiatan saya.

Padre Luis da Costa meneruskan tugas imamatnya di Uatolari (Viqueque) dan kemudian di Ossu (Viqueque). Pada Mei 1976 setelah misa Paskah ia didekati oleh sekretaris Zona Laga (Baucau), João Maubere, yang menuduhnya telah menghubungi orang-orang Katolik di kota dan karena hanya mengajarkan agama, bukan ideologi

politik. Namun Padre Luis baru ditangkap untuk yang kedua kalinya pada Desember 1976, sebagai bagian dari konflik internal antara CCF dan Aquiles Freitas*:

Pada tanggal 1 November 1976 kami meninggalkan pekerjaan kami karena tentara Indonesia masuk dari arah Quelicai (Baucau); oleh karena itu kami bersama rakyat lari ke Gunung Kaebukaekami. Kami tinggal di sana, saya mengadakan misa di sana seperti biasa... Mereka kemudian mengatakan akan ada pertemuan antara Komando [Nicolau] Lobato dan Aquiles... Mereka akan rapat tanggal 2 Desember tetapi tidak pernah jadi. Mereka malah menangkap semua orang di Uabitae di puncak gunung Matebian termasuk saya [dan Aquiles Freitas, sebagai bagian dari konflik internal di wilayah timur]. Kami ditangkap atas perintah CCF [Comite Central da Fretilin, Komite Pusat Fretilin]. Pertama, mereka membawa kami ke Baguia di mana kami dipaksa untuk bekerja, memotong rumput dengan tangan kosong selama satu minggu. Kemudian mereka membawa kami ke Nahareka di mana kami dibagi menjadi dua kelompok. Beberapa pergi ke Gunung Girai, tapi grup saya yang terdiri atas 14 orang pergi ke Cascol.†

Di sana saya melihat pelanggaran yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan perang yang berlangsung di sekitar. Saya melihat bahwa kebanyakan di sana bukan pemimpin-pemimpin seperti Nicolau Lobato, Vicente Reis, tetapi orang-orang yang kedudukannya kecil. Mereka ini yang kebanyakan tidak mengerti politik, menuntut rakyat untuk melakukan hal-hal yang tidak digariskan oleh pendidikan politik. Sering rakyat juga terlalu takut untuk bicara karena tentara bersenjata yang berkuasa... Mereka tidak memberikan makanan kepada kami karena pada waktu itu tidak ada makanan. Dilihat dari sudut pandang politik, tindakan-tindakan mereka disebut rehabilitasi politik untuk orang-orang yang tidak mengikuti ideologi Fretilin... Saya sering melihat pelanggaran hak-hak asasi manusia. Kepada saya mereka melakukan interogasi tapi mereka tidak memukuli saya, mereka hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Mereka menuduh saya bahwa saya mengajarkan kepada orang-orang bahwa Fretilin adalah komunis.

* Aquiles Freitas ditangkap oleh Fretilin bersama Ponciano Gomes pada Desember 1976 dan dilaporkan dieksekusi pada Januari 1977 (lihat kotak mengenai Luis da Costa setelah paragraf 238 di atas). Menurut Xanana Gusmão, Aquiles Freitas adalah bekas tentara Portugis dan komandan Fretilin yang memiliki pasukan yang loyal kepadanya di wilayah perbatasan Timor-Leste. Meskipun ia adalah pendukung kemerdekaan, ia tidak mendukung seluruh ideologi Fretilin. CCF menganggapnya sebagai ancaman, memerintahkan penangkapannya, dan membunuhnya sebagai orang yang reaksioner. [Xanana Gusmão, *To Resist is to Win*, hal. 45, catatan kaki 78.]

† Menurut Xanana Gusmão, Cascol (Komisariat Sektor Tengah Timur) *Naroman* adalah komando yang dibuat oleh Vicente dos Reis (Saha) Komisaris Politik dari Sektor Tengah Timur, barat Venilale (Baucau). [To Resist is to Win, hal 29 dan 44.]

Pada 23 Desember 1976, T132 membacakan putusan atas para tahanan. Padre Luis tidak dituduh atas pelanggaran berat apapun dan diizinkan pergi tapi dengan “bebas bersyarat”. Yang lain dituduh sebagai pengkhianat bangsa dan dijatuhi hukuman mati. Aquiles Freitas dijatuhi hukuman mati sebagai seorang pengkhianat dan Padre Luis mendengar bahwa ia dieksekusi pada Januari 1977. Setelah dibebaskan, Luis melanjutkan tugasnya sebagai pastor hingga ia menyerahkan diri kepada ABRI pada November 1977.²³⁴

239. Bekerjasama dengan militer Indonesia dianggap sebagai pelanggaran yang jauh lebih berat oleh pemimpin Fretilin ketimbang menghubungi militer atau berencana menyerahkan diri. Karenanya, hal ini berakibat hukuman yang lebih keras. Penyiksaan selama interogasi dan masa penahanan yang panjang adalah hal yang biasa jika seseorang dituduh atas tindak kejahatan ini.

240. António da Silva menuturkan kepada Komisi tentang penangkapannya pada masa awal pemerintahan Fretilin. Ia tidak disiksa melainkan ditempatkan dalam kondisi yang berat dan dalam waktu yang lama:

Pada bulan April 1976 saya dan rekan-rekan kerja saya ditangkap di Ailemi Lohono, Subdistrik Uatolari [Viqueque], Nama-nama rekan-rekan saya tersebut ialah Mausela, Mário Nascimento, Ernesto da Cruz, Alfredo da Cruz, João da Silva, Teotónio Sarmento da Silva, José de Araújo, dan Raguél da Silva. Kami ditangkap karena...kami dicurigai bekerjasama dengan pemerintah dan militer Indonesia. CCF memerintahkan pasukan bersenjata (Falintil) untuk datang ke rumah saya kemudian menangkap saya dan anak saya Teotónio Sarmento da Silva. Anak saya pada waktu itu usianya antara 14 atau 15 tahun.

Saya, anak saya, dan teman-teman kami ditangkap, diikat satu per satu kemudian diikat secara bergandeng dua-dua. Kemudian, kami disuruh berjalan menuju ke kota Zona [Subdistrik], dikawal ketat sampai kami tiba. Saya tidak mengenali para tentara Falintil...

Penangkapan dilakukan atas perintah Komisaris Politik T133... Setibanya di Zona, kami diinvestigasi satu per satu. Bentuk interogasi tidak sama, ada yang saat diinterogasi juga disiksa, ada yang diinterogasi tidak disiksa dan ada yang diinterogasi kemudian dibunuh yakni Francisco Xavier dari sub- Uatolari [Viqueque] dan satu orang lagi dari Mondelo, dari Desa Uaibobo [Ossu, Viqueque]. Keduanya ialah rakyat sipil.²³⁵

241. Perilaku di medan pertempuran juga menjadi ujian kesetiaan kepada Fretilin. Gaspar Luis suatu kali terluka di dadanya saat baku tembak dengan ABRI pada Agustus 1976 dan karena itu ia meninggalkan medan pertempuran dan kembali ke markas. Ia dikutuk sebagai pengkhianat dan ditempatkan di sebuah lubang

selama dua bulan di *Renal Nundamar* (Remexio, Aileu) atas perintah anggota senior Fretilin T136 dan anggota CCF, T135. Komisaris politik, Mau Lear, memerintahkan pembebasannya.²³⁶

Konflik bersenjata internal

242. Merasa semakin terdesak oleh militer Indonesia, kepemimpinan Fretilin mulai mengalami keretakan. Akibatnya, banyak orang ditangkap dan disiksa karena mengkritik pemimpin ini atau itu. Komisi juga diberi tahu mengenai orang-orang yang dicap sebagai reaksioner atau pengkhianat karena mengkritik pemimpin atau mendukung pemimpin yang dianggap reaksioner atau pengkhianat. Dalam beberapa kasus, orang-orang ini dieksekusi (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

Konflik antara Helio Pina dan José da Silva, Oktober 1976

243. Perselisihan internal awal di antara para pemimpin Fretilin terjadi antara komisaris politik Sektor Perbatasan Utara (Fronteira Norte), Helio Pina, dan Kepala Staf Falintil José da Silva pada 1976 di Fatubessi, Ermera. Celestino de Carvalho Alves ditahan sebagai bagian dari perselisihan tersebut. Ia menuturkan kepada Komisi bahwa konflik tersebut timbul karena Helio Pina dan Komandan Sebastião Sarmento berupaya menurunkan José da Silva menjadi wakil kepala staf. Menurut Celestino, pada 6 Oktober 1976 komandan kompi, José Soares, atas perintah dari José da Silva, membawa Helio Pina dengan paksa ke Fatubessi untuk menyelesaikan perselisihan itu. Akan tetapi, pada malam itu sekelompok orang yang dipimpin Komandan Pedro Lemos dari Leorema (Bazartete, Liquiçá), yang mendukung Helio Pina, menyerang Fatubessi. Mereka berhasil menyelamatkan Helio Pina tetapi beberapa orang meninggal dalam serangan itu.²³⁷ Celestino Alves yang merupakan perwira keamanan Fretilin di Fatubessi, lari dengan José Soares dan 60 anggota pasukannya untuk bersembunyi di Leorema. Sebelum mereka mencapai tempat persembunyiannya, mereka ditangkap oleh komandan Falintil, T137. Mereka ditahan sebentar di Leorema dan kemudian dibawa ke Poerema dan dipenjarakan di sebuah rumah kosong:

Di Poerema kami benar-benar mengalami siksaan yang lebih dari biasanya. Kami dipukuli, dibakar, diikat kuat-kuat hingga kami dapat merasakan darah kami berhenti mengalir. Dan ada beberapa yang dibawa ke luar dan dibunuh. Juga, beberapa dari kami disiksa seperti Yesus Kristus di kayu salib. Kami diperintahkan tidur di tempat yang penuh lumpur atau tempat tidur kami disiram air supaya basah. Mereka memukuli kami dengan kayu, cambuk, bambu dan...mereka memukuli tubuh kami dengan pipa dan besi. Hingga akhirnya kami tidak sadar apa yang terjadi pada kami di dalam tahanan...Kekejaman luarbiasa...Dan kami tidak diberi makan selama penahanan.²³⁸

244. Selama setahun berikutnya, mereka dipindahkan ke beberapa pusat penahanan termasuk Cailaco (Bobonaro) dan Saugata (Maubara, Liquiçá). Mereka berpindah sejalan dengan majunya pasukan Indonesia. Beberapa orang terbunuh dan yang lainnya meninggal karena keadaan yang sangat buruk di tempat mereka ditahan, termasuk sangat kurangnya makanan dan obat-obatan. Setelah satu tahun, hanya tiga dari 62 orang yang ditangkap masih hidup. Mereka adalah Celestino, José da Silva, dan seorang pria bernama Jerónimo Albino da Silva. Kemudian, suatu hari pada November 1977 mereka dipanggil ke Fatubessi untuk diinterogasi oleh komisaris dari Sektor Perbatasan Utara, T139. Celestino Alves mengatakan kepada Komisi bahwa selama interogasi T139 mengancamnya dengan pistol, senjata lain, dan seutas tali (untuk menggantungnya). Mereka ditahan di sebuah *Estufa* (lihat di bawah: Pusat Penahanan Fretilin - Ermera, paragraf 272 - 275) dan dari sana, T139 pada akhirnya membebaskannya.²³⁹

245. Jerónimo Albino da Silva juga menuturkan kepada Komisi mengenai penahanannya dalam kaitannya dengan konflik yang terjadi antara José da Silva dan Helio Pina di Sektor Perbatasan Utara. Ia menyebut bahwa banyak yang ditahan bersamanya, termasuk di antaranya: Celestino Alves (Sei Moris), José Soares, José da Silva, José Carvalho, Cornelio Soares, Alberto Babo, Afonso Araújo, Manuel Alves, Aparicio, Belarmino Alves, Bosco Araújo, dan Domingas Madeira. Ia menjelaskan bagaimana ia ditahan di Asulau (Hatolia, Ermera) dan atas kaitannya dengan José da Silva. Jerónimo da Silva menegaskan bahwa para tahanan itu dipukuli bertubi-tubi, ditendang, dan dihantam saat ditangkap dan ketika di Poerema.²⁴⁰ Ia pada akhirnya dikirim ke *Renal* Saugata di mana ia menetap sampai ABRI menyerang pada Februari 1979.

246. Eduardo de Jesus Barreto menuturkan kepada Komisi bahwa sekitar 40 orang tahanan dieksekusi sebagai akibat konflik internal antara José da Silva dan Helio Pina pada Oktober 1976.²⁴¹

Perselisihan di Iliomar, Lautém, November 1976

247. Komisi juga diberi tahu mengenai konflik antara Francisco Hornay, seorang komandan Falintil dan teman Aquiles Freitas, dengan para pemimpin Fretilin di Subdistrik Iliomar. Menurut anak angkat Francisco Hornay, Constantino, Francisco membentuk kelompok yang dianggap “reaksioner” di Iliomar karena ia tidak setuju dengan ideologi politik Fretilin. Masyarakat Desa Tirilolo (Iliomar, Lautém) menceritakan kisah berikut (lihat kotak di bawah).

Konflik internal Fretilin di Iliomar, November 1976

Pada 1976, terjadi konflik internal Fretilin di Iliomar. Sekretaris Zona Iliomar, Thomas Pinto (Lesamau) dan pemimpin Falintil, Afonso Henrique, mengeluarkan perintah untuk menangkap Francisco Ruas Hornay karena salah satu anggota pasukannya, Mateus Oliveira, menunjukkan perilaku tidak disiplin dengan menembak sebuah kelapa di Cacaven (Lospalos, Lautém) pada saat kembali dari Lospalos. Francisco Hornay melakukan kritik-diri di depan komisar politik Juvenal Inácio (Sera Key), di Akara (Iliomar, Lautém) dan kemudian mengikuti Sera Key ke Belta Trés untuk menjalani *justo correctivo* selama 14 hari, sementara pada saat yang sama membersihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang bertentangan dengan ideologi Fretilin.

Ketika ia kembali dari Belta Trés, Francisco Hornay memberi pelatihan militer kepada bekas pasukan *Segunda Linha* dan pemuda di Larisoru-Mumu. Anggota-anggota CCF memutuskan bahwa pelatihan tersebut membawa akibat negatif dan karena itu pelatihannya ditutup. Anggota CCF kemudian mengumumkan bahwa semua warga sipil harus berkumpul di satu tempat untuk memperoleh pendidikan politik, yang kali ini ditentang Hornay. Anggota CCF mengundang Hornay untuk menghadiri pertemuan di Istasi, Fuat. Tapi, ia tidak pergi karena mendengar isu bahwa ia akan ditangkap di pertemuan tersebut. Ia juga menghentikan orang-orang dari dua desa, Iliomar II dan Tirilolo, agar tidak pergi ke sana, tetapi ia mengirim 45 orang untuk mewakilinya, yang dipimpin oleh Celestino Barreto dan Bernardo Soares. Merasa tidak aman, Hornay pergi ke Uaibitae (Quelicaí, Baucau) untuk meminta bantuan dari Aquiles Freitas. Ketika ia kembali, ia membawa senapan-senapan G-3, granat, dan amunisi, namun karena membutuhkan amunisi lebih banyak, ia memerintahkan 12 orang anggota pasukannya mengambil amunisi dari Uaritin, sebuah gudang amunisi di Iliomar.

Lantas, Hornay mengirim dua orang anggota pasukannya, Celestino Barreto dan Afonso Barreto, untuk menemui pemimpin-pemimpin dari Iliomar seperti Jeremias dos Reis dan Gregorio Pinto, guna mengupayakan penyelesaian konflik tersebut. Para pemimpin itu tidak berada di tempat, dan Celestino serta Afonso ditangkap dan dibawa ke Borutau (Iliomar). Hornay kemudian mengirim dua adik lelakinya, Afonso Pinto dan Silvino Ximenes, untuk mencoba menyelesaikan konflik tersebut. Keduanya kembali karena situasi menjadi makin tegang dan mereka tidak dapat bertemu dengan para pemimpin tersebut di Iliomar. Akhirnya, Hornay sendiri pergi dengan pasukannya menemui para pemimpin Iliomar untuk

membahas kesalahpahaman yang berkembang. Begitu kelompok tersebut sampai di Larisoru-Mumu (Lospalos, Lautém), Serafin Jeronimo menembak ke arah Hornay dan Hornay balik menembak. Hornay menangkap dua anggota pasukan Serafin.

Seminggu berikutnya, Hornay memimpin serangan atas kelompok Sera Key dan Fernando Txay, yang melukai seorang anggota Falintil dan seorang warga sipil. Sera Key dan Fernando Txay mengorganisasi tentara Falintil dan warga sipil untuk membentuk pembatas dan mengejar Hornay dan anggota pasukannya di Gunung Paitah (Iliomar). Hornay dan 49 anggota pasukannya dengan sepucuk senjata G-3 telah melarikan diri ke Uato Carbau. Beberapa orang warga sipil di Gunung Paitah menyerahkan diri kepada kelompok Sera Key dan Fernando Txay. Sembilan orang ditahan dan disiksa oleh anggota pasukan Sera Key. Seorang warga sipil lainnya, Orlando da Costa, menjadi prihatin karena perlakuan atas tahanan dan pergi menemui Fernando Txay untuk mengatakan kepada si komandan bahwa ia harus pergi secepat mungkin atau semua tahanan akan dibunuh.

Sekitar seminggu setelah bertemu Orlando, Fernando Txay memimpin orang-orang dari empat desa ke Uato Carbau untuk menangkap Hornay dan anggota pasukannya. Sebelum mencapai kelompok Hornay, mereka mendengar bahwa Paulo Hornay telah ditangkap dan dibunuh oleh T155, komandan Fade (*Forca da Defesa*, juga dikenal dengan nama *Armas Brancas*) [lihat Bagian 5: Gerakan Resistansi: Struktur dan strategi]. Kemudian para komandan termasuk Fernando Txay, Tito Cristovão da Costa (Lere Anan Timor), Thomás Pinto (Lesamau), dan lainnya memasuki Kulaldere (Uato Carbau) dan menangkap 75 orang dari kelompok Hornay. Mereka semua diikat dan dibawa ke Tailoi-Caentau, Iliomar.

Di Iliomar para tahanan tersebut disiksa dan digantung di tiang rumah. Mereka menjerit kesakitan sampai para pemimpin Fretilin T813, T143, dan T814, dan sejawat Falintil mereka T815, T144, T816, dan T817 memutuskan bahwa jika para tahanan tidak akan diinterogasi, mereka lebih baik dibunuh. Akan tetapi, kalau mereka menjalani semacam proses interogasi, mereka tidak seharusnya disiksa.

Pada 17 November 1976 diputuskan bahwa delapan orang akan dieksekusi di Kakinatar, Loré (Lautém): mereka adalah António Oliveira, Oscar Ferreira, Angelo Pinto, António Soares, Silvino Ximenes, Julio Ximenes, Libertino Bastos, dan Bernardo Soares. Mereka yang dituduh melakukan pelanggaran kurang berat hanya diminta menjalani *justo correctivo* selama dua bulan di Cacaven. Di sana mereka harus membuat garam, memotong pohon sagu, dan membuat tepung sagu. Anak-anak yang tidak melakukan kesalahan disuruh pulang tetapi kebebasan mereka dibatasi.

Kemudian Francisco Hornay, bersama Duarte Ximenes Pinto, José Nunes, Dinis de Castro, Manuel Sarmento, dan Marcos Pinto, ditangkap di Quelicai dan dibawa ke Iliomar. Keenam tahanan tersebut tidak diinterogasi tetapi segera dieksekusi di Muapepeh (Iliomar, Lautém).²⁴²

248. Anak lelaki Francisco Hornay, Constantino, berumur sekitar 11 tahun ketika ia dan anggota keluarganya yang lain berada di antara orang-orang yang ditahan oleh seorang komandan Fretilin, T142, dan anggota Fretilin, T143, di Uato Carbau pada November 1976. Ia menuturkan kepada Komisi:

Kami ditangkap dini hari. Kami dibawa kembali ke Iliomar dan diikat di sebuah tempat yang bernama Sailari dan kami dimasukkan ke kandang babi...setelah itu kami diinvestigasi. Pertama para pemimpin lalu orang kecil. Maka saya terakhir diinterogasi setelah 4 atau 5. Mereka tetap mengikat kami dan sehari hanya diberi makan sekali. Mereka mengikat dengan tali hitam dan ada yang dengan tali biasa. Kami diikat dalam tiga lapis. Kaki dimasukkan ke dalam pasung bambu, kemudian secara bergiliran diinterogasi seorang Falintil bernama T144 sebagai Komandan operasional. Dia yang menginterogasi saya pagi itu. Komandan senior Falintil T145 dan T146 juga menginterogasi saya. Setelah itu, saya dibebaskan, dengan syarat saya bekerja di dapur umum, menimba air...mencari kayu bakar dan menggembala kerbau.²⁴³

Perselisihan antara Francisco Xavier do Amaral dan CCF, September 1977

249. Perselisihan yang paling terkenal dan serius di antara pemimpin Fretilin terjadi ketika presiden dan pendiri Fretilin, Francisco Xavier do Amaral, dituduh berkhianat terhadap perjuangan Resistansi dan digulingkan. Konflik terjadi dalam situasi kerawanan pangan, kesehatan, dan keamanan, yang menyebabkan meningkatnya korban pada masyarakat sipil di basis-basis perlawanan, juga dalam konteks mendekatnya pergerakan militer Indonesia. Francisco Xavier do Amaral berpendapat bahwa masyarakat harus dibiarkan menyerah dan meneruskan perjuangan dari kota-kota dan desa-desa, tetapi mayoritas anggota CCF menentang pendapat tersebut.²⁴⁴ Konflik tersebut telah menciptakan suasana saling tidak percaya di antara para pemimpin Fretilin dan akibatnya banyak pendukung dan rekan-rekan Amaral ditahan, disiksa, dan dianiaya dengan semena-mena.

Penahanan dan penyiksaan Francisco Xavier do Amaral

Francisco Xavier do Amaral menuturkan kepada Komisi mengenai penangkapan dan penahanannya karena pandangannya tentang masa depan perjuangan:

Maka mulailah ada perbedaan dalam Fretilin. Kami mulai memisahkan diri. Beberapa orang berkata bahwa doktrin [Fretilin] ini tidak benar. Beberapa orang menyatakan bahwa doktrin ini benar tetapi orang-orang tidak mengikutinya secara tepat. Beberapa berkata doktrin ini baik. Kami mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain...Sejak saat ini mereka menangkap saya, memenjarakan saya, dan menuduh saya...Bahwa saya mengirim penduduk untuk menyerah supaya di masa yang akan datang ketika saya menyerahkan diri kepada Indonesia, Indonesia akan memberikan jabatan sebagai jenderal atau menteri kepada saya. Inilah argumen mereka yang menentang saya.²⁴⁵

Xavier do Amaral menggambarkan penangkapannya pada September 1977 berikut penahanannya kepada Komisi:

Semua anggota CCF memutuskan penangkapan itu. Saya tertidur di Mindelo dekat Orsanako [Turiscaí, Manufahi]. Saya terbangun karena teriakan Alarico [Fernandes] yang mengacungkan pistol ke telinga saya. Ia berkata: "Pengkianat, kamu ditangkap!" Penangkapan ini gagasan Alarico, dialah orang yang melaporkan saya sebagai orang yang memiliki ide antirevolusioner. Ini telah menjadi persoalan sejak saya kembali dari Mozambik [pada 1975]...Saya telah menawarkan posisi itu kepada Alarico...[tetapi] mereka [para anggota CCF] mengetahui bahwa jika saya turun, mereka akan kehilangan kepercayaan massa di basis. Mungkin problem ini terus berlanjut hingga saya ditangkap.

Selain mengacungkan pistol, tidak ada penyiksaan fisik lain yang dilakukan terhadap saya. Mereka membawa saya ke Aikurus [Remexio, Aileu], tetapi sebelumnya mereka pergi berkeliling Soibada [Manatuto], Fatuk Makerek, desa di Laclubar [Manatuto], dan kemudian kembali ke Turiscaí [Manufahi]...Saya tidak disiksa selama perjalanan, hanya dicaci-maki dengan kata-kata seperti, "Bicara kau, pengkhianat bangsa, reaksioner!" Perjalanan menghabiskan waktu satu bulan.

Ketika saya tiba di Aikurus, saya diadili oleh CCF. Mereka menuduh saya pengkhianat bangsa dan menyuruh rakyat menyerah. Alaricolah orang yang menuduh saya...[Tetapi] setiap orang ada di sana, seperti Nicolau [Lobato], Vicente Reis [Sahe], Juvenal Inácio [Sera Key]. Mereka semua menuduh saya, tetapi melalui Alarico karena

ia adalah menteri dalam negeri dan keamanan. Keputusan mereka adalah mengirim saya ke Sektor Tengah Timur. Saya dikirim bersama 20 orang lain, termasuk Diogo Moniz.

Tentang siksaan yang saya alami selama di tahanan, saya ditemplei besi panas oleh T90. Semua anggota CCF...ada di sana, menyaksikan.

Tidak seorang pun memperhatikan [hal-hal seperti makanan, air dan pakaian]. Bilamana kamu sekarat, kamu lapar, itu urusanmu. Saya mendapat makanan dari para penjaga tetapi ini karena mereka mengasihani saya, bukan karena CCF memerintahkan mereka memberi makan. Banyak tahanan mati, mungkin 75 persen. Ketika saya ditahan, kira-kira 50 orang ditahan bersama saya, tetapi setiap hari empat atau lima orang mati. Jika mereka tidak bisa berjalan, mereka dibunuh. Pada akhirnya hanya lima selamat.

Amaral terus menerus dipindahkan untuk menghindari militer Indonesia:

Di Uaimori [Viqueque] saya ditahan di sebuah lubang. Ketika kami tiba di suatu tempat, para tahanan akan diperintahkan menggali lubang mereka sendiri...Kadang-kadang kami tinggal satu minggu lamanya, kadang-kadang dua minggu di satu tempat, karena kami selalu dikejar-kejar ABRI.

Pada Oktober 1978, ketika kelompok itu berada di pantai selatan Viqueque, kamp pertahanan mereka dikepung oleh ABRI dan meskipun mencoba melarikan diri, Amaral berhasil ditangkap oleh Yonif 744.²⁴⁶

250. Seperti halnya Francisco Xavier do Amaral yang mengalami penyiksaan, rekan-rekan dan pendukungnya pun ditangkap dan disiksa karena berhubungan dengannya. Dalam biografinya, Xanana Gusmão menggambarkan penyiksaan yang dialami oleh Adão Amaral, José dos Santos, Pedro Sanches, Gil Fernandes, Raul dos Santos, Victor Gandara, José da Conceição, Dinis Carvalho, dan Andrade Sarmiento dan bagaimana ia mengintervensi untuk mengakhiri semua itu. Xanana menggambarkan dampak dari penyiksaan itu terhadap Pedro Sanches: “Sekujur tubuhnya terbakar dan bau napasnya memualkan. Kami takut dia akan mati.”²⁴⁷

251. Komisi menerima pernyataan dari beberapa saksi tentang penangkapan orang-orang yang diduga sebagai pendukung Xavier do Amaral. Domingos Maria de Andrade memberikan pernyataan kepada Komisi yang mengenai penangkapan dan penganiayaan terhadap dirinya ketika ia dipukuli, ditendang, dan diancam dengan bayonet oleh anggota pasukan Fretilin, T151 dan T152, pada 1978 di Mindelo (Turiscai, Manufahi). Dia berkata bahwa dirinya dihina di depan banyak orang dan dituduh sebagai pengkhianat. Ia ditahan selama sebulan dan selama itu ia hanya makan kulit ubi jalar dan sisa-sisa makanan.²⁴⁸

252. Domingas Araújo Sarmiento menuturkan kepada Komisi mengenai penangkapan dan penyiksaan terhadap suaminya, Alberto Viteho, di Desa Fatisi (Laulara, Aileu):

Saya bertemu dengan suami saya Alberto, dia sebagai estafetnya Xavier [do Amaral]. Tidak lama kemudian muncul pasukan Fretilin langsung menangkap suami saya, lalu melepaskan pakaiannya, kemudian menyuruhnya memakai sebuah sarung dan membawa kami ke Trassu. Dia digantung di atas pohon kelapa. Lalu [mereka] memukul, menyiksa sampai berdarah. Mereka [Falintil] mengancam saya untuk tidak memberi tahu hal tersebut dengan ancaman akan dibunuh.²⁴⁹

253. Thomás Araújo, komandan senior zona Turiscai antara 1975 dan 1977, ditangkap dalam sebuah pertemuan CCF di Tutuluro (Same, Manufahi) pada September 1977, sehubungan dengan kasus Francisco Xavier do Amaral. Ia ditangkap dengan beberapa orang lainnya dan ditahan selama 27 hari di Aikurus (Remexio, Aileu) dan selama tiga bulan di Fatubessi (Hatolia, Ermera) bersama delapan orang rekannya. Dua dari sembilan orang yang ditahan di Fatubessi akhirnya dieksekusi, yaitu Domingos dan Mário Bonifacio.²⁵⁰

254. Feliciano Soares, mantan anggota Fretilin, menceritakan kepada Komisi bahwa ia ditangkap pada Desember 1977 karena dicurigai telah bertemu dengan komandan garis depan utara, Martinho Soares, yang loyal kepada Xavier do Amaral dan menganjurkan orang-orang agar menyerah.* Ia dibawa ke Abat (Fatubessi, Ermera) atas perintah Komisariat Perbatasan Utara. Di sana ia diinterogasi oleh T153 dan Assistente T154, tetapi tidak disiksa. Ia ditahan selama dua bulan.²⁵¹

255. Januario Faria menuturkan kepada Komisi bahwa ia ditangkap oleh Fretilin di Caicasa (Fatuberliu, Manufahi) dan diinterogasi tentang upayanya menghubungi Xavier do Amaral dengan maksud menyerah. Ia tidak disiksa tapi ditahan di Caicasa dengan tahanan lainnya termasuk Padre Mariano (lihat di bawah, setelah paragraf 293).²⁵²

256. Grasindo Mariano ditangkap oleh Komandan Fretilin T155 dan anggota Fretilin T157 di Tutuluro (Same, Manufahi) pada 11 September 1976 dan dituduh sebagai pendukung Xavier do Amaral. Ia ditahan di Gereja Bubulau, Tutuluro, selama dua bulan dan kemudian dipindahkan ke Fahinehan (Fatuberliu, Manufahi). Di sana, ia bekerja di kebun selama delapan bulan.²⁵³

Menegakkan disiplin

257. Fretilin menahan orang-orang untuk mendisiplinkan atau menghukum pelanggaran terhadap peraturan Fretilin di basis-basis perlawanannya. Komisi juga mendengar tentang penyiksaan dan penganiayaan terhadap mereka yang ditahan, khususnya pada masa-masa setelah itu.

* Komandan Fretilin, Martinho Soares, ditahan pada saat yang sama dengan Feliciano Soares dan sama-sama ditahan di Abat. Ia menghilang. [Lihat CAVR, Ringkasan Kasus 902 tentang Martinho Soares, 2003.]

258. Ijaias da Costa mengatakan kepada Komisi bahwa ia direkrut secara paksa oleh Falintil. Suatu malam pada 1976 di Remexio (Aileu), ia ditugaskan melakukan jaga malam tetapi karena ia tak terbiasa menggunakan senjata, tak sengaja ia meletuskan senjatanya. Ia dihukum dengan cara ditahan tanpa diberi makan selama dua hari oleh Kompi Samarusa.²⁵⁴

259. Pada 1977, Natalino de Andrade, seorang serdadu Fretilin, tidak datang bekerja selama dua hari di Remexio (Aileu). Komandan peleton memerintahkan Sekretaris Zona T147 dan dua anggota Fretilin lainnya, yaitu T148 dan seorang lainnya untuk menangkap Natalino. Mereka mengikatnya dan kemudian memukuli dan menendangnya selama kurang lebih satu jam. Ia ditahan selama empat bulan.²⁵⁵

260. Orang-orang lainnya ditahan jika mereka mencari makanan di luar zona yang telah ditentukan Fretilin. Henrique Pinto menyatakan bahwa di Dilor (Viqueque), Fretilin mengizinkan masyarakat sipil tinggal dan menggarap tanah di beberapa zona tertentu, sementara zona lainnya diberi tanda merah untuk menunjukkan zona perang. Warga sipil yang ingin memasuki zona tersebut harus memperoleh izin terlebih dahulu. Tetapi, banyak warga sipil yang tertangkap di zona terlarang itu ketika mereka sedang mencari makanan. Sekali dua kali, pelanggaran seperti ini ditoleransi oleh pasukan Fretilin, tetapi jika warga sipil tersebut tertangkap berkali-kali, mereka akan ditangkap dan ditahan. Karena ketika itu kondisi persediaan makanan sangat kritis dan penyakit terjadi di mana-mana, banyak tahanan yang mati di Dilor. Pinto menyatakan, ketika itu tak ada seksi logistik yang mengurus kebutuhan pokok para tahanan.²⁵⁶

261. Mariano Menezes ditangkap tiga kali karena ia menolak menjadi anggota Falintil. Ia menuturkan kepada Komisi bahwa ia diinterogasi dan dipaksa bekerja di kebun-kebun, tetapi ia tidak disiksa.²⁵⁷ Horacio Mendonça menuturkan kepada Komisi bahwa ia ditahan selama sepuluh hari pada 1977 oleh anggota senior CCF, T40, karena ia mengkritik pasukan Falintil yang mengambil singkong milik penduduk. Ia berkata bahwa dirinya tidak disiksa selama dalam tahanan.²⁵⁸

262. Pada 19 Juni 1977 komandan regional, T149, menugaskan Jaime da Costa, seorang komandan seksi, untuk menjaga tahanan di Lacro, Manatuto. Suatu malam, Jaime da Costa jatuh tertidur dan seorang tahanan berhasil melarikan diri. Komandan Regional memerintahkan agar ia dibawa ke Aikurus (Remexio, Aileu). Pada malam hari ia ditempatkan di dalam lubang. Ia dikeluarkan dan diberi makan pada pagi harinya. Ia ditahan selama satu tahun dan empat bulan. Jaime da Costa mengatakan kepada Komisi bahwa ia tidak disiksa selama dalam tahanan, tetapi dipaksa bekerja di ladang, menanam singkong dan sayur-sayuran, yang hasilnya diberikan kepada komando Fretilin.²⁵⁹

263. Seseorang dapat juga dihukum karena tidak mematuhi perintah komandan. Silveiro Trindade, contohnya, mengatakan kepada Komisi bahwa pada April 1978 ia dan rekannya Alarico Trindade, keduanya anggota Fretilin di Desa Matata (Railaco, Ermera), dipanggil ke tempat persembunyian dua komandan Falintil, yaitu Mau Brani dan Mau Buti. Ketika mereka tidak datang, satu peleton pasukan

Falintil dikirim untuk mencari mereka. T141, salah satu prajurit di peleton tersebut, mengikat korbannya dengan tali bambu, menenggelamkan mereka di dalam air, kemudian menahan mereka dalam “kandang ayam” selama dua minggu. Selama dalam tahanan, T155 memukul mereka dengan potongan kayu.²⁶⁰

Renal dan pusat-pusat penahanan Fretilin

264. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada Komisi menggambarkan penahanan baik di pusat-pusat penahanan biasa maupun di *Renal-Renal*, meskipun sering perbedaan antara keduanya tidak jelas. Ada beberapa jenis tempat penahanan di dalam *Renal*. Komisi mengidentifikasi setidaknya dua jenis. Pertama, lubang di dalam tanah yang ditutupi dengan batang-batang kayu atau papan, dengan batu besar di atasnya atau ditutup dengan tanah. Ukuran lubang-lubang ini bervariasi. Banyak yang dalamnya hanya 80 cm, hingga tahanan yang ada di dalamnya terpaksa duduk di tanah, dan beberapa lubang dalamnya sekitar empat meter, seperti lubang-lubang di *Renal Nundamar, Remexio*.²⁶¹ Kedua, pusat penahanan di atas tanah yang dikelilingi oleh tembok dari batu setinggi dua hingga tiga meter.²⁶²

265. Marito Reis menuturkan kepada Komisi bahwa antara 1976 dan 1977, Vicente Reis (Sahe) melakukan perjalanan ke subdistrik di sektor Tengah Timur (Centro Leste) untuk menjelaskan kepada para komandan Falintil bahwa para tahanan tidak akan dibunuh tapi harus direhabilitasi. Ketika itu, para tawanan ditahan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Di Laleia (Manatuto) misalnya, Marito Reis mengatakan bahwa ia melihat orang-orang ditahan di dalam sebuah lubang yang ditutupi dengan bambu dan tanah. Orang-orang itu hanya dapat bernapas melalui pipa bambu yang sangat kecil. Ia mengatakan bahwa *Renal-Renal* dibuat sekitar Juli - Agustus 1977. *Renal* pertama dibangun di sektor Centro Leste di suatu tempat yang disebut Ai-Manas Rai di dekat Lacluta (Viqueque). Tanah di tempat itu subur dan Fretilin untuk sementara tidak perlu lari dari pasukan Indonesia.²⁶³ *Renal* didirikan di basis-basis perlawanan Fretilin di setiap sektor sebagai bagian dari strategi revolusi.²⁶⁴

Prinsip di balik pendirian Renal-Renal ini adalah agar pendidikan berlangsung di tengah revolusi dan orang yang memiliki pandangan tidak sesuai dengan garis partai atau yang melanggar peraturan disiplin akan “direhabilitasi”.

266. Prinsip-prinsip yang dinyatakan berada di balik *Renal* adalah “*Lutar, aprender e produzir*”, atau “Berjuang, Belajar, dan Memproduksi”. Para tahanan dibentuk ke dalam koperasi tani dengan maksud menciptakan suasana kesamaan, saling

.....
* Bandingkan António Amado de Jesus Ramos Guterres yang mengatakan bahwa *Renal-renal* dibangun pada 1976 setelah Konferensi Sobaida pada Mei di tahun yang sama. *Renal* yang pertama, menurut António Guterres, ialah *Renal Nundamar* di Remexio, Aileu (lihat boks di bawah, setelah paragraf 288). [Wawancara CAVR dengan António Amado de Jesus Ramos Guterres, Lacló, Manatuto, 11 Desember 2003.]

mendukung, dan gotong royong. Selain menyediakan pendidikan dalam hal baca-tulis serta ideologi politik, diharapkan pula bahwa tahanan yang memiliki pendapat atau pandangan tidak sesuai dengan konsep dan strategi Fretilin atau ideologi perjuangan akan “direhabilitasi” agar mendukung revolusi.

267. Siang hari para tahanan bekerja di ladang-ladang dan di malam hari mereka mendengarkan pelajaran tentang ilmu politik. Hasil tanam dari *Renal* dibagi-bagikan antara Falintil dan penduduk sipil. Jadwal di suatu *Renal* biasanya adalah kerja antara pukul 08.00 sampai 16.00 dengan istirahat untuk makan siang selama satu jam. Pada pukul 16.00 para tahanan mandi kemudian mendengarkan pendidikan politik yang disampaikan oleh *adjunto* atau komisaris politik.²⁶⁵

268. Karena itu, secara teori, *Renal* sangat berbeda dengan penjara biasa, tetapi pada praktiknya perbedaannya tidaklah terlalu banyak. Kebebasan para tahanan dirampas dan sering untuk jangka waktu yang tak tentu, sampai mereka dianggap telah berhasil “direhabilitasi” dan mendukung Fretilin dan revolusi.²⁶⁶ Komisi juga mendengar tentang sejumlah laporan penyiksaan dan penganiayaan terhadap para tahanan di *Renal*, bahkan juga eksekusi. Selain itu, dengan semakin banyaknya wilayah yang direbut pasukan Indonesia, penduduk tidak dapat menanam hasil tanaman pangan sehingga terjadi kekurangan pangan. Banyak orang yang mati di tahanan Fretilin, baik dalam *Renal* maupun penjara biasa, karena kelaparan dan sakit. Antônio Amado de Jesus Ramos Guterres, yang hadir pada Konferensi Soibada pada 1976 menjelaskan:

*Ketika seseorang dicurigai, dia harus pergi ke Renal untuk menjalani rehabilitasi. Mereka menerima pendidikan politik tentang politik revolusioner. Banyak orang tidak menyukai politik revolusioner dengan ideologi komunisnya [tetapi] Fretilin...menjalankannya dengan kekerasan. Pemimpin-pemimpin Fretilin sering kali berkata bahwa para reaksioner telah dibawa ke sebuah Renal untuk diberi pendidikan. Tapi banyak yang disiksa atau dibunuh di dalam Renal. Beberapa yang ditahan di dalam Renal dilepaskan. Beberapa mati kelaparan.*²⁶⁷

269. Kondisi *Renal* yang satu dengan yang lainnya juga berbeda, disebabkan *Renal-Renal* tersebut diawasi oleh para komisaris politik yang bertanggung jawab atas sektor tertentu dan karena situasi militer di setiap sektor berbeda.²⁶⁸ Di beberapa *Renal*, kondisinya cukup bagus, sementara di *Renal-Renal* lainnya Komisi mendengar banyak terjadi penyiksaan dan penganiayaan terhadap para tahanan dan banyak yang mati karena kelaparan dan penyakit.

270. Komisi mengidentifikasi beberapa alasan untuk pelepasan para tahanan dari *Renal-Renal* atau dari pusat-pusat penahanan Fretilin/Falintil. Para tahanan dapat melarikan diri atau dibebaskan setelah adanya campurtangan dari pemimpin. Tahanan dapat juga bebas setelah penyerangan militer Indonesia atas basis pertahanan Fretilin, yang juga merupakan tempat penahanan. Para tahanan dapat membebaskan diri setelah pemenjaranya melarikan diri. Kadang-kadang para tahanan ditangkap oleh ABRI ketika serangan seperti itu terjadi dan kemudian dibebaskan.

271. Berikut ini adalah pernyataan para saksi yang diterima oleh Komisi tentang penahanan di pusat-pusat penahanan dan di *Renal-Renal*, di Distrik Lautém, Viqueque, Manufahi, Aileu, dan Ermera.

Ermera

272. Komisi menerima 49 laporan tentang anggota Fretilin/Falintil yang ditahan oleh Fretilin di Distrik Ermera. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di wilayah ini. Komisi juga mendengar tentang penduduk sipil yang ditahan oleh Fretilin/Falintil. Tidak semua penahanan ini terjadi di pusat-pusat penahanan atau *Renal*. Beberapa orang dirampas kebebasannya begitu saja dan ditahan di tempat mana saja yang bisa dijadikan tempat penahanan. António Malibere, misalnya, menuturkan kepada Komisi bahwa ia ditahan di sebuah gua di Lauana (Letefoho, Ermera) selama empat hari oleh komandan Falintil, T121.²⁶⁹

273. Pada 1977 sebuah *Renal* yang dibangun di Fatubessi. Adriano João, mantan asisten politik Fretilin di Cailaco (Bobonaro) menuturkan kepada Komisi tentang perlakuan yang diterima para tahanan:

*Ada yang dipukul, diikat kedua tangannya, kemudian dimasukkan dalam penjara bawahtanah, diberi makan satu hari satu kali, kadang tidak samasekali dalam satu hari. Ada yang mati karena sakit dan lapar.*²⁷⁰

274. Salah satu penjara di Ermera sangat unik, yakni Estufa di Abat (Fatubessi, Ermera). Menurut Celestino Alves, Estufa ini dibangun oleh Portugis untuk membakar getah karet. Tempat itu sangat gelap, sempit, dan tidak ada lubang udara. Tempat ini hanya cukup untuk menahan tak lebih daripada tiga orang, itupun mereka harus duduk “dengan kaki terlipat”. Mereka tidak dapat meluruskan kaki mereka, berdiri, atau bergerak. Celestino ditahan dalam Estufa dengan komandan José Soares dan Jerónimo Albino oleh Komisaris Politik T139 pada November 1977. (Lihat bagian Konflik antara Helio Pina dan José da Silva, Oktober 1976, paragraf 243 – 246.)

275. Ketiga laki-laki itu ditahan di dalam Estufa siang dan malam dan hanya diperbolehkan keluar paling banyak satu kali sehari. Mereka menerima makan sekali sehari, itupun dalam jumlah yang sangat sedikit, seperti sepotong kecil singkong atau sepiring jagung rebus untuk bertiga. Celestino menuturkan kepada Komisi bahwa mereka tidak tahu apakah mereka akan tetap hidup atau mati. Mereka ditahan di dalam Estufa selama sebulan sampai akhirnya Helio Pina membebaskan mereka.²⁷¹

Viqueque

276. Markas besar Sektor Centro Leste berada di Viqueque. Di antara semua komisariat sektoral yang ada, Komisariat Politik Fretilin, Cascol, merupakan yang paling inovatif secara ideologis. Komisi mendengar mengenai sejumlah penjara dan *Renal* di Distrik Viqueque.

277. Clementino da Silva menceritakan kepada Komisi bahwa ia ditahan, diikat, dan dibawa ke Nahareka (Ossu, Viqueque) karena dituduh melakukan kontak dengan keluarganya di kota. Ia ditahan di Nahareka selama enam minggu dan kemudian ditahan di Uailaba selama enam minggu. Ketika dalam penahanan, ia diberi pengajaran tentang ideologi Fretilin di *Centro de Formação Política (Ceforpol)*.²⁷²

278. António da Silva menceritakan kepada Komisi bahwa ia dituduh bekerjasama dengan militer Indonesia untuk menyerahkan diri. Ia ditangkap pada April dan dibawa ke Zona 15 de Agosto di Ailemimi (Lohono, Uatolari, Viqueque) serta ditempatkan dalam “kandang babi”. Ia mengatakan bahwa “kandang babi” itu dibuat dari tumpukan batu setinggi dua hingga tiga meter dan ada sepuluh orang yang ditahan di setiap “kandang”. Ia juga berkata bahwa para tahanan hanya diberi makan sekali sehari, tetapi ia dipaksa untuk memasak dan membawa makanan untuk Falintil yang berada di medan perang. António juga menuturkan bagaimana ia dipaksa menghadiri kelas-kelas pendidikan politik di *Centro de Formação Política*. António ditahan hingga November 1978 dan menyerah ketika basis Resistansi dihancurkan.²⁷³

279. Paulo da Costa menceritakan kepada Komisi tentang sebuah penjara besar Fretilin di Uaimori (Viqueque) yang beroperasi antara 1976 dan pertengahan 1979, sebelum akhirnya ABRI menyerang dan menduduki wilayah itu. Lubang-lubang besar digali dan kemudian ruang-ruangnya dibagi menjadi beberapa sel tahanan. Sel “tiga bulan” diperuntukkan bagi mereka yang dituduh “berkepala dua” (berpura-pura setia pada Fretilin tapi sebenarnya bekerja untuk pihak Indonesia). Dalam sel-sel ini, para tahanan hanya mendapat jatah makan satu kali sehari tetapi setelah tiga bulan akan dibebaskan. Paulo da Costa menuturkan kepada Komisi tentang kelompok ketiga yang melakukan pelanggaran “berat” dan kemudian dibunuh, baik dengan cara diberi air garam atau ditembak. Komisi tidak dapat mengonfirmasi praktik penahanan dengan sistem sel berjejer seperti ini.²⁷⁴ Menurut beberapa sumber, Uaimori dikenal sebagai *Renal* yang paling berhasil merehabilitasi orang. Karena alasan itulah, Francisco Xavier do Amaral ditahan di sana.²⁷⁵

280. Masyarakat Baulale di Desa Irabin de Baixo (Uato Carbau, Viqueque) mengatakan bahwa Fretilin/Falintil sering menangkap orang yang dicurigai menjadi mata-mata Indonesia dan kemudian ditahan dalam “kandang-kandang babi”. Para tahanan kemudian diinterogasi dalam keadaan diikat dengan tali kuda. Beberapa informan menuturkan kepada Komisi bahwa seorang tahanan bernama Paulo Fernandes tewas karena ia diikat terlalu kuat. Ada juga tiga lainnya yang dieksekusi, tetapi Xanana Gusmão membebaskan tahanan yang tersisa ketika ia berkunjung ke Baulale.²⁷⁶

281. Xanana Gusmão menceritakan kepada Komisi bahwa *Renal* di Uлуу (Uatolari, Viqueque) beroperasi dengan prinsip harus bisa menyediakan pendidikan baca-tulis dan politik dan mengizinkan tahanan menanam tanaman pangan. Xanana Gusmão mengatakan bahwa *Renal* yang berada di bawah tanggungjawabnya bahkan menghasilkan hasil panen yang melimpah, tetapi ketika musuh menyerang wilayah tersebut, mereka menghancurkan semua hasil panen. Orang-orang yang dituduh reaksioner atau pengkhianat ditangkap dan ditahan di *Renal* Uлуу. Para tahanan

cukup bebas dan diperbolehkan mengunjungi rumahnya atau menerima kunjungan dari keluarganya di *Renal*.²⁷⁷

282. Cipriano da Cruz menggambarkan bagaimana ia dan tujuh anggota keluarganya ditahan dan diikat oleh Fretilin pada 1977 dan dibawa ke sebuah *Renal* di Uatolari (Viqueque), kemungkinan *Renal* Ulusu. Mereka disekap dalam sebuah lubang selama enam bulan sebelum akhirnya Xanana memerintahkan agar 280 orang yang ditahan di *Renal* itu dibebaskan.²⁷⁸

Lautém

283. Fretilin juga memiliki beberapa pusat penahanan di Distrik Lautém yang digunakan untuk menahan orang-orang yang dicurigai telah berkhiyanat, reaksioner, berhubungan dengan para pemimpin yang tengah dicurigai, atau telah melakukan pelanggaran lainnya. Pusat-pusat penahanan itu meliputi Belta Trés di Subdistrik Irara (Fuiloro, Lospalos), sebuah penjara kandang babi di Subdistrik Loré, Penjara Besi Manas di Subdistrik Luro, dan penjara kandang babi lainnya yang menjadi *Renal* Marabia di Iliomar. Pernyataan dari para mantan tahanan di penjara-penjara dan *Renal-Renal* ini berisi deskripsi terperinci tentang kehidupan sebagai tahanan Fretilin pada masa itu.

284. Orlando Silva Correia Belo (Fernando So), menuturkan kepada Komisi tentang kondisi di tiga penjara kandang babi yang berada di Distrik Lautém pada 1976, sebelum *Renal-Renal* berdiri:

Kami tak dipukul, tapi satu hal yang harus kami lakukan tangan harus tetap diangkat karena tali tetap di pinggang dan leher. Setelah satu bulan ditahan di penjara kandang babi di Belta Trés, Irara, kami lalu dipindahkan ke sebuah kandang babi di Loré. Selama ditahan kami diberi makan sehari satu kali...Kadang dua minggu mandi sekali. Setelah dua bulan kami dipindahkan ke Iliomar.

*Di Iliomar tahanan dibagi tiga kelompok. Masing-masing sembilan orang untuk satu kandang babi. Kondisi makanan masih sama seperti di Belta Trés dan Lore. Kami makan sagu, pucuk enau, jagung, dan singkong.*²⁷⁹

285. Gaspar Seixas, mantan wakil sekretaris zona Iliomar dari 1975 hingga 1977 menuturkan kepada Komisi bahwa ia melihat orang-orang ditahan di *Renal*. Ia mengatakan:

*Aktivitas yang dilakukan orang-orang di Renal biasanya: bekerja di sawah dan kebun pada siang harinya, pada malam hari dimasukkan kembali ke dalam penjara tetapi dijaga ketat oleh Falintil. Hasilnya diberikan kepada Falintil...dan juga terhadap penduduk yang kekurangan makanan. Selain bekerja para tahanan mendapat pendidikan politik tentang ideologi Fretilin serta prinsip perjuangan. Yang memberi pendidikan di Kamp Iliomar adalah Adjunto Lere Anan Timor.*²⁸⁰

286. Modesto de Jesus Sanches menceritakan kepada Komisi tentang masa ketika ia berada di Penjara Besi Manas pada 1978:

Soal makan, jika ada rezeki seharinya seorang mendapatkan antara 9 sampai 12 biji jagung, selebihnya hanya minum air. Karena hanya makan 9 atau 12 biji jagung sehari, ketika giliran untuk mengambil kayu bakar, kami merasa senang sekali, karena kesempatan untuk makan daun-daunan yang kita temui di jalan. Biasanya lima orang mendapat giliran mengambil kayu, itu diikat menyambung dari pinggang yang satu ke pinggang yang lain. Jaraknya sekitar dua meter, sementara sisa tali itu dipegang Falintil menjaga kita. Bila...dari atas bukit salah seorang melihat sebuah kemiri di sungai, dia lari untuk mendapatkan [kemiri itu], terpaksa menarik kita dari belakang dan jatuh bertumbukan. Dalam hati kita tertawa, tapi karena lapar, segala cara bisa dilakukan agar bisa makan.

Suatu hari tempat kami dibom pesawat musuh, setelah itu Adjunto T125 datang ke arah kami, mengatakan kami semua adalah pengkhianat dan memerintahkan seorang anggotanya mengambil kayu besar lalu menghampiri Cristovão Lopes dan memukul di kepalanya beberapa kali, sehingga langsung tewas. Saya melihat sendiri bagaimana penjaga itu memukul mati lalu menarik dia untuk dikuburkan. Korban lain adalah Julião, meninggal tepat di sebelah saya, karena lapar. Dia tidak pernah diberi makan karena dicurigai mata-mata musuh.

Pada Juni 1978, Adjunto Xanana saat berkunjung ke Luro dan memerintahkan anggotanya melepaskan tali dari tangan dan kaki kami. Kami disuruh duduk di luar jemur terik matahari. Lalu disuruh mandi dan gunting rambut. Tubuh kami banyak kutu anjing dan ketumba, karena selama enam bulan tak diizinkan mandi. Xanana sendiri yang mengantar kami dan menyerahkan kepada keluarga di Iliomar. Selama saya dipenjara di Besi Manas, istri, empat orang anak saya, keponakan, dan ibu saya dimasukkan ke Renal Marabia, Iliomar untuk bekerja di sana.²⁸¹

287. Horacio de Conceição Savio adalah bagian dari kelompok tahanan yang sama dengan Modesto Sanches dan ia menuturkan kepada Komisi kisah serupa:

Pada tahun 1978, saya ditangkap bersama João Veinas, Alcino Savio, Cristovão Lopes, Julião Cacavei, Mário Amaral, Felix da Conceição, dan Bernardino.... Kami ditangkap di Iliomar oleh komandan T156 dan anakbuahnya dan dibawa ke Penjara Besi Manas di Luro. Di sana kami ditinju ke wajah dan dipukul dengan pistol di kepala. Menyebabkan sekujur tubuh kami membengkak, luka, dan mengeluarkan darah.

Pasukan Fade terus memukul dan menendang, lalu kami digantung ke tiang di terik matahari selama sembilan hari. Mulai pukul 8 pagi

hingga pukul 4 sore baru dilepaskan dan dimasukkan ke sel penjara lagi. Tapi tangan tetap diikat ke belakang. Selama digantung, kami terus dipukul. Dan orang-orang yang termasuk memukul mereka adalah Komandan T156, Adjunto T156, T152, dan T159. Soal makanan memang diberikan namun sangat sedikit dan hanya sekali dalam sehari. Bila ingin keluar ke WC, harus minta izin tapi tetap dikawal oleh pasukan Fade. Sesudah itu mereka disuruh bekerja di sawah. Setelah ditahan kurang lebih sebulan, ketika Adjunto Xanana berkunjung ke Penjara Besi Manas baru kami dibebaskan.²⁸²

Aileu

288. *Renal* utama di Timor-Leste, yaitu Nundamar, terletak di Subdistrik Remexio. Nundamar merupakan kamp rehabilitasi Fretilin untuk menanamkan ideologinya, tetapi tempat itu juga merupakan *Renal* yang paling terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Xanana Gusmão menuturkan kepada Komisi bahwa terdapat banyak kasus perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan, termasuk pemukulan dan pembakaran dengan menggunakan kayu bara api, dan ini disaksikan oleh Komisararis Politik Sera Key.²⁸³

Rehabilitasi Nasional (*Renal*) Nundamar di Remexio, Aileu

Kamp Rehabilitasi Nasional Nundamar adalah *Renal* pertama yang dibangun oleh CCF. *Renal* ini didirikan di Remexio (Aileu).²⁸⁴ Ini merupakan *Renal* terbesar dan terpenting. CCF mendirikan Nundamar sebagai model untuk mempraktikkan ideologi politik CCF. *Renal* ini punya program belajar membaca dan menulis, ceramah penyadaran berpolitik, dan program pengembangan ekonomi bagi para tahanan yang terdiri atas warga sipil, anggota Fretilin, dan pasukan Falintil.²⁸⁵ Xanana Gusmão menuturkan kepada Komisi bahwa komisararis politik Sera Key mengunjungi Nundamar untuk mempelajari metode-metode yang diterapkan di *Renal* Nundamar sebelum ia mendirikan *Renal* di Sektor Tengah Timur.

Adjunto Sebastião Montalvão (Lais) ditunjuk oleh CCF sebagai penanggung jawab utama untuk *Renal* Nundamar. 'Lais' adalah singkatan dari "Localização da Administração e Informação Serviços Secretos".²⁸⁶ José Manuel dos Santos mengatakan kepada Komisi bahwa terdapat sekitar 300 orang yang dipenjarakan di *Renal* Nundamar antara 1977 dan 1978. Nundamar ditutup pada 28 Mei 1978 ketika terjadi penyerangan oleh militer Indonesia. José Manuel dos Santos pernah menjadi tahanan di Nundamar dan menceritakan kepada Komisi:

Saya ditangkap oleh satu peleton Falintil atas perintah Komandan Sektor T160, karena menolak menjadi Komandan KOMPI Sektor Centro Norte. Awalnya posisi saya adalah Colaborador Comandante Comphania Sektor Centro Leste. Setelah ditangkap saya dibawa menghadap komandan Sektor T160, yang mengatakan saya reaksioner karena menolak keputusan tersebut lalu dimasukkan ke Renal Nundamar. Di sana saya dipukul dengan tangan... dan dipukul dengan cambuk 'Chicote Liberdade' yang saya tidak hitung berapa kali dipukul tapi cukup lama saya dipukul.

Sesudah itu saya bersama teman-teman lain yang ikut ditahan seperti Zacarias, Mário Mesquita, Marcelino, Gaspar, Alexio, António, Maurubi, orang Laclubar, dan tahanan yang lain dipaksa memotong kayu batangan yang ukuran besar dan dibawa ke Renal Nundamar. Kemudian saya disuruh memasak garam di Pantai Metinaro selama dua minggu. Setelah saya dilihat oleh istri Komisaris Politik Mau Lear, akhirnya saya disuruh menjadi perawat untuk mengobati masyarakat dan Falintil. Sedangkan untuk mengobati tahanan di Renal Nundamar, itu hanya berdasarkan inisiatif saya sendiri... Status saya sebagai tahanan hingga Renal Nundamar diserang oleh militer Indonesia.²⁸⁷

Pembunuhan dan penyiksaan para tahanan

Sebagian tahanan dipukuli hingga tewas. José dos Santos mengatakan kepada Komisi mengenai sejumlah tahanan yang meninggal, antara lain: Martino Mesquita yang mula-mula dipukuli dengan tangan dan dihajar oleh T162 dengan menggunakan alu penumbuk padi hingga tewas pada 5 Desember 1977; Afonso Araújo dan Leki Mau, keduanya dari Metinaro (Dili); Mauloco dari Ailok (Dili bagian timur); Beremau dari Darlau (Dili bagian timur); dan seorang pemuda (tanpa identitas) dari Hera (Dili).²⁸⁸ Ia juga memberikan kesaksian bahwa Domingos Dulas, dari Maubisse (Hato Builico, Ainaro), ditembak mati di Nundamar pada 17 Februari 1977.²⁸⁹

Beberapa tahanan di Nundamar dibawa keluar dan dieksekusi: Zacarias dan Maria Fatima dilaporkan dieksekusi berdua di *Aldeia 8*, Desa Liurai, pada 8 Maret 1977. José Manuel dos Santos menuturkan kepada Komisi bahwa sebuah lubang digali kemudian dua tahanan diikat menjadi satu dengan tali yang melilit di leher dan pinggang lalu ditembak dan jasad mereka jatuh ke dalam lubang.²⁹⁰

José Manuel dos Santos juga mengatakan kepada Komisi bahwa penyiksaan dan penganiayaan tahanan merupakan hal yang biasa terjadi di Nundamar. Ia berkata bahwa tahanan dipukul dengan tongkat, batang besi, potongan bambu, atau dengan cambuk yang disebut *Chicote de Liberdade* (Cambuk Pembebasan). Cambuk ini terbuat dari kulit kerbau yang dipilin, mirip cambuk yang biasa digunakan untuk kuda dan kerbau, dan panjangnya sekitar 80 cm.²⁹¹

José Manuel dos Santos mengatakan kepada Komisi bahwa beberapa orang biasa menggunakan cambuk pada tahanan, di antaranya: komandan T163, T162, komandan kompi T165, T166, T167, T168, T169, T170, T171, T174, T175, T176, dan Sekretaris T177. Kelompok ini merupakan agen utama bagi T136 (anggota senior CCF).

Bentuk penyiksaan dan penganiayaan yang lain adalah membakar tubuh tahanan dengan rokok atau dengan batang besi yang dipanaskan di api atau memasukkan mereka ke dalam lubang. Di *Renal* Nundamar, ada dua lubang seperti itu, satu berbentuk huruf 'E' dan yang satunya lagi berbentuk huruf 'U'. Keduanya memiliki kedalaman sekitar tiga meter. Lubang tersebut ditutup berlapis-lapis—lapisan pertama adalah batang kayu besar yang diletakkan melintang, lapisan berikutnya adalah belahan bambu, dan yang terakhir adalah tanah yang disekop di atasnya. Ada satu pintu pada tiap lubang dengan sebuah tangga yang digunakan oleh tahanan untuk turun-naik.

Kondisi di dalam *Renal*

Pada siang hari, waktu para pemimpin penjara diisi dengan pekerjaan seperti pendidikan politik bagi rakyat atau mengadakan pertemuan dan malam hari diisi dengan hiburan, seperti tari-tarian. José Manuel dos Santos menuturkan kepada Komisi bahwa T136 dan orang-orangnya mabuk ketika berdansa sambil meminum tuak aren, lalu dengan semena-mena menangkap dan memukul orang dengan *Chicote de Liberdade* kemudian melemparkan mereka ke lubang.²⁹² Ia mengatakan bahwa pada suatu kesempatan, ketika diadakan pesta, ia melihat T136 dan orang-orangnya mabuk dan tanpa alasan yang jelas, mereka memukul Luis Barros dengan sangat keras sehingga kepalanya terluka parah.

Ruang gerak para tahanan sangat dibatasi. José Manuel Monteiro, orang yang bertanggung jawab atas *Renal* Nundamar, menuturkan kepada Komisi bahwa tahanan tidak dapat berbaring di dalam lubang, mereka hanya bisa duduk atau berdiri bahkan mereka harus menyilangkan kaki karena ruang yang sempit. Tahanan yang akan dieksekusi tidak akan diperkenankan keluar dari lubang bawahtanah.²⁹³

Alasan penahanan di Nundamar

Orang-orang yang ditahan oleh Fretilin di *Renal* Nundamar adalah mereka yang dianggap pengkhianat. Tapi, José Manuel dos Santos mengatakan kepada Komisi bahwa tidak ada proses investigasi yang jelas untuk membuktikan tuduhan seperti itu. Juga tidak ada proses kritik atau *justo correctivo* di Nundamar karena tuduhan yang dilontarkan cukup berat. Kondisi para tahanan yang dianggap

sebagai pengkhianat sangat memprihatinkan. Komisi menerima laporan yang menunjukkan bahwa tidak ada perawatan medis bagi mereka yang menderita sakit yang ditahan karena status politik mereka dan bahwa orang yang sakit dipaksa terus bekerja di ladang komunal. Karena para tahanan ini dianggap pengkhianat, tidak boleh ada alasan seperti sakit atau alasan lainnya. Setiap orang harus tetap bekerja di kebun atau sawah bahkan pada saat mereka sakit.

Pada saat bekerja di ladang, tahanan yang dikategorikan telah melakukan pelanggaran berat diikat pada pinggangnya antara satu tahanan dengan yang lain, berjarak dua hingga tiga meter, dan dijaga oleh tentara Fretilin/Falintil. José Manuel dos Santos mengatakan bahwa pada bulan-bulan pertama penahanannya, pekerja menerima air dari penjaga ketika mereka haus.²⁹⁴ Tetapi setelah Xavier do Amaral ditahan, para tahanan tidak diberi air kecuali jika anggota Falintil yang menjaga mereka berbaik hati. Baik José Manuel dos Santos maupun José Monteiro menceritakan kepada Komisi bahwa kekurangan minum ini menyebabkan banyak tahanan sakit dan meninggal.²⁹⁵

Para penjaga di Nundamar tidak memperlakukan perempuan berbeda dari laki-laki, khususnya dalam hal pekerjaan. Misalnya Lucia Osório Soares, istri Xavier do Amaral, rambutnya dicukur dan dipaksa bekerja di *Renal*.

Makanan dan minuman

Makanan terdiri atas kulit kerbau, kuda, atau kambing yang dipotong kecil-kecil dan dicampur dengan singkong atau cempedak dan sayur seperti daun talas liar. Campuran ini dimasak dan setiap tahanan menerima dua sendok besar. Jika telah matang, singkong dibagikan kepada para tahanan—setiap tahanan memperoleh satu potong. Daging yang berasal dari hewan potong diberikan kepada penanggung jawab *Renal* dan orang-orangnya atau dikirim kepada anggota CCF yang lain yang tinggal di Sektor Centro Norte.²⁹⁶ José Manuel dos Santos mengatakan bahwa makanan tidak cukup dan banyak orang yang mati karena kelaparan dan terserang penyakit. Satu kelompok warga sipil yang dibawa dari Ilimanu (Laclo, Manatutu) yang terdiri atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, hampir semuanya mati karena kelaparan atau penyakit, atau dibunuh.²⁹⁷

Perpindahan tahanan antar-*Renal*

Menurut José Manuel dos Santos, tahanan sering dipindahkan antar-*Renal*. Tahanan dibawa ke Nundamar dari penjara di Laclo dan Laclubar (Manatutu), Laulara (Aileu), dan sektor-sektor lain. Sebagian besar warga sipil yang dibawa paksa dari Ilimanu (Laclo) yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, meninggal karena

kelaparan dan penyakit. Sebagian besar mati karena kelaparan namun sebagian karena dieksekusi. Komisi juga mendengar dari José Manuel dos Santos bahwa barang-barang milik tahanan, seperti perhiasan emas, pakaian, dan barang-barang lainnya, dirampas oleh T136 dan diberikan kepada orang-orang yang dekat dengannya dan bahwa T136 pernah mengatakan: “Fogo aos traidores, abaixo aos traidores!” (Tembak semua pengkhianat; bunuh semua pengkhianat!).²⁹⁸

289. Maria Fatima Pinto juga menuturkan:

Saat itu kami sedang mengikuti pesta. Sekitar jam 3 pagi, mereka [anggota Fretilin Sector Centro Norte Basis B, Zona Laulara, Aileu] mengatakan, pesta harus ditutup karena “di antara kami sudah ada pengkhianat”. Pagi itu mereka...menangkap aku termasuk beberapa orang.

Kami dibawa ke renal Nundamar, Remexio. Aku diinterogasi mengenai barang-barang yang dikirim oleh Maria Goreti seperti minyak, obat, dan kain. Aku sempat menerima barang-barang itu dan diserahkan kepada João da Silva Godinho lalu disampaikan ke Nicolau Lobato. Karena tak ada informasi yang jelas, aku ditahan di gua Renal selama dua hari bersama temanku; Maria Antónia dari Lacro. Aku dikeluarkan oleh Nicolau Lobato, karena tak ada bukti mengenai kesalahanku.

Aku melanjutkan hukuman di Renal selama tiga bulan. Selama ditahan kami disuruh bekerja di ladang dan sawah. Tahun 1978 banyak tahanan yang dibunuh oleh anggota Fretilin dengan cara membuang granat ke dalam lubang.²⁹⁹

290. Di *Renal* Nundamar pada 1978 Fretilin membuat tempat untuk menampung anak-anak yang disebut *crèche*. Anak-anak yang dititipkan di *crèche* adalah anak-anak dari tahanan Fretilin yang berumur dua sampai lima tahun dan terkadang jumlahnya lebih daripada 50 anak.³⁰⁰ Menurut Maria Antónia, salah seorang tahanan yang ditugaskan mengurus anak-anak di *crèche*, semua anak di *crèche* meninggal, termasuk dua orang anak Francisco Xavier do Amaral. Dia mengatakan mereka kekurangan gizi dari rendahnya mutu makanan yang mereka terima dan mereka juga hanya dimandikan dengan air, tanpa sabun.³⁰¹

291. Raul da Costa menyaksikan penganiayaan dan pembunuhan tahanan yang ditempatkan di *Renal* Nundamar dan Erluli, dan pembunuhan lain yang dilakukan oleh Fretilin karena pada saat itu ia adalah Wakil Komandan Zona Remexio. Ia memberikan kesaksian tentang penyiksaan yang dilakukan oleh Fretilin terhadap para tahanan di dalam *Renal*, termasuk kepada Francisco Xavier do Amaral yang menurutnya disiksa dengan bara api yang diletakkan di dadanya.³⁰²

Penahanan Ambulan

Domingos Maria Alves (Ambulan) ialah Sekretaris Zona yang ditangkap di Liquidoe (Aileu). Ia dibawa ke Erluli (Remexio, Aileu) karena dituduh menjadi anggota kelompok Xavier. Ambulan disebut pengkhianat dan disiksa oleh *Adjunto* Fretilin, T187, dan anggota CCF, T90. Ia digantung dan dipukuli. Hampir semua anggota tubuhnya dipukuli dengan tangan atau kayu dan dia juga ditendang. Ambulan mengatakan kepada Komisi bahwa T90 menginterogasinya di depan beberapa orang menteri dalam jajaran pemerintahan Fretilin seperti Mau Lear, Hata, Mau Kruma, Sahe, Nicolau Lobato, dan Afonso Rendentor. T90 bertanya apakah Ambulan pengawal Xavier. Ambulan menjawab ya. Ambulan disiksa lagi oleh T187 dan T90. T187 memukul Ambulan dengan menggunakan sepotong kayu hingga kayu tersebut patah di tangannya. T187 kembali mengambil potongan kayu yang lain. Ia memukul Ambulan hingga mematahkan tiga potong kayu. Kemudian ia mengambil potongan kayu yang terakhir, yang ujungnya membara dan ia gunakan kayu tersebut untuk membakar kulit Ambulan. Ambulan menceritakan bahwa banyak orang yang dieksekusi di depan umum dan T90 berkata bahwa hal ini untuk mengingatkan kepada khalayak dan tahanan lainnya agar tidak melakukan hal yang sama.

Ambulan mengatakan bahwa pada suatu hari pada 1977, T90 menunjukkan sepucuk surat, yang menurut T90 telah dikirim oleh orang-orang Liquidoe. Isi surat itu adalah Ambulan tidak diperbolehkan kembali ke Liquidoe. Surat tersebut sepertinya ditulis oleh T90 dan T132. Tetapi di dalam surat tercantum nama-nama seperti Gaspar, Mateus, Lequiboe, António, Mau João, Berleke, dan Bernardo. Berdasarkan surat tersebut Ambulan ditempatkan di lubang bawahtanah. Ia ditempatkan bersama João Bosco, temannya, dan tinggal di sana selama satu setengah bulan. Ia pernah ditahan bersama Xavier do Amaral selama satu minggu sebelum dipindahkan ke Fatubessi, Ermera. Ambulan dibawa ke Fatubessi bersama sembilan tahanan lainnya: Luis Koto dari Uatolari (Viqueque), Mário Bonifacio dari Laclo (Manatuto), Hermenegildo dari Maubisse (Hatu-Builico, Ainaro), José Sabere dan Diogo dari Fahinehan (Fatuberliu, Manufahi), dan Thomás, Domingos, Unkoli, dan Nuno dari Turisca (Manufahi).

Ambulan menuturkan bahwa dari sepuluh orang tersebut, lima ditempatkan di sel khusus dan kemudian tewas setelah militer Indonesia melakukan serangan besar-besaran. Kelima orang tahanan yang terbunuh adalah Luis Koto, Mário Bonifacio, Domingos, Martinho, dan seorang perempuan dari Suai (Covalima). Ambulan dan keempat orang temannya dibebaskan.³⁰³

292. Komisi juga mendengar beberapa kejadian penyiksaan di Liquidoe (Aileu). Guilherme Brito ditangkap di Fatukaimauk di Faturilau (Liquidoe, Aileu) pada 1977. Ia diikat dan dipaksa oleh T196 masuk sungai dengan kedalaman satu setengah meter dan berdiam di sana selama tiga hari dan tiga malam.³⁰⁴ Daniel de Andrade menuturkan kepada Komisi bahwa bapaknya (juga Daniel de Andrade) ditangkap pada 1977 oleh Komandan Falintil T197 dan T187 di Liquidoe (Aileu). Mereka memukulnya dengan menggunakan sebatang kayu, kemudian mengikatnya di kayu salib selama satu minggu. Kemudian ia diturunkan dan ditempatkan di sebuah lubang tahanan bawahan selama beberapa minggu, sebelum ia dikeluarkan dan dipukul dengan sepotong kayu hingga tewas.³⁰⁵

Manufahi

293. Di Manufahi Komisi mendengar paling tidak satu *Renal* di Dotik (Alas, Manufahi) yang mempunyai kondisi yang serupa dengan penjara di dekat Uitame di Viqueque, yang dijelaskan di atas.³⁰⁶ Tomé da Costa Magalhães menuturkan kepada Komisi mengenai penjara di Rameliak dan Lakeruhun, keduanya di Desa Caicasa (Fatuberliu, Manufahi).

Penahanan Tomé da Costa Magalhães

Pada 9 Februari 1976, ketika ABRI mulai menyerang wilayah Fahinehan (Manufahi), seorang komandan Fretilin yang bernama Matias memerintahkan semua orang termasuk Tomé Magalhães untuk melarikan diri ke hutan. Di hutan, Tomé bersembunyi di kebunnya di Ailora, Fahinehan. Ternyata Francisco Xavier do Amaral dan Padre Mariano juga bersembunyi di sana. Mereka berkumpul bersama, namun Xavier kemudian pindah ke lokasi yang lain dan Padre Mariano tetap tinggal bersama Tomé di Ailora.

Pada 9 September 1976, atas perintah Komisaris Politik, T199, Komandan T200, dan empat orang anggotanya yang membawa dua senapan G-3 dan dua Mauser, datang ke Ailora untuk menangkap Tomé dan Padre Mariano. Tomé dan Padre Mariano diizinkan pulang terlebih dahulu untuk mengumpulkan barang-barangnya lalu dengan menunggang kuda menuju ke Rameliak (Fatuberliu, Manufahi).

Ketika mereka tiba di Rameliak, anggota Fretilin mendekati Padre Mariano dan menariknya agar ia terjatuh dari kudanya. Tomé dan Padre Mariano diinterogasi lalu ditempatkan di sel terpisah yang hanya dipisahkan dengan dinding bambu. Tomé menjelaskan bahwa sel tersebut sangat sempit dan tidak memungkinkan seseorang untuk bergerak bebas. Mereka dijaga ketat siang dan malam, dan jika mereka ingin pergi buang air, mereka dikawal oleh dua anggota Falintil yang bersenjata. Pada pagi harinya T199 memanggil Padre Mariano untuk diinterogasi dan ketika ia tiba, T199 memerintahkan

dua orang kepercayaannya untuk melepaskan pakaian Padre Mariano. Kemudian T199 mencambuk Padre Mariano hingga ia tidak sadarkan diri lalu mengembalikannya ke dalam selnya. Padre Mariano berulang kali diinterogasi mengenai hubungannya dengan Xavier dan disiksa selama diinterogasi.

Tomé mengatakan bahwa mereka tidak diberi makan oleh Fretilin selama mereka ditahan. Sebaliknya, keluarganya yang harus membawa makanan ke penjara. Makanan yang dibawa selalu diperiksa oleh Fretilin dan kadang-kadang dirampas. Tomé menuturkan bahwa ia tidak pernah diinterogasi dan disiksa, tetapi T199 dan orang-orangnya bergiliran memukul Padre selama tiga hari. T199 kemudian mencoba memaksa Tomé untuk bertarung melawan Padre Mariano, tetapi tubuh sang pastor begitu terluka dan bengkak dan kakinya kaku sehingga ia tidak mampu berdiri. Tomé dan Padre Mariano dipenjarakan selama tiga bulan di penjara Remeliak kemudian dipindahkan ke penjara Caicasa di Fatuberliu.

Di Caicasa mereka ditempatkan di sebuah rumah panggung dengan puluhan bambu runcing di bawahnya. Mereka ditahan di sana dengan kondisi yang mengenaskan selama satu bulan. Kaki mereka dikelang dengan papan kayu berlubang dan diikat kuat sehingga mereka tidak dapat melarikan diri dan tangan mereka diikat ke belakang. Bila tiba waktu makan, penjaga harus mengangkat kepala mereka lalu menyuapi makanan ke mulut mereka. Mereka hanya diberi makan satu kali sehari satu potong ubi kayu dan air. Tahanan tidak bisa pergi buang air, sehingga mereka harus mengeluarkan kotoran di tempat yang membuat tempat tahanan itu bau menyengat karena tinja dan air seni. Cuaca juga sangat dingin di daerah tersebut, tetapi mereka tidak diberi selimut.

Tomé mengatakan bahwa pada 19 September 1977 ABRI memasuki Fahinehan. Pengawal-pengawal Fretilin mengeluarkan dia dan Padre Mariano dari rumah bambu dan memaksa semua tahanan berjalan, diikat bersama, dari Caicasa ke Lakeruhun (Fatuberliu, Manufahi). Di sana mereka ditempatkan bersama dengan tahanan dari Fatuberliu di bawah Komandan T206. Banyak tahanan yang disiksa dan dianiaya, misalnya ditusuk dengan bayonet atau disundut dengan rokok. Kemudian tahanan dipindahkan lagi ke Rameliak kecuali sang pastor yang dibawa ke Liquidoe.

Belakangan Tomé bertanya kepada T199 mengapa ia ditahan begitu lama tanpa penjelasan mengenai apa kesalahannya. T199 menjawab: "Karena kamu bekerjasama dengan Francisco Xavier do Amaral dan Padre Mariano. Karena itulah saya menghukum kamu. Tapi percaya pada saya, kamu akan segera dibebaskan." Kemudian Tomé ditempatkan di *Renal* Rameliak untuk bekerja di kebun dan menanam sayuran. Pada 8 Agustus 1978, setelah hampir dua tahun di tahanan, Tomé dibebaskan dan ia kembali kepada keluarganya.³⁰⁷

294. Valentino da Costa Noronha juga menceritakan tentang penyiksaan dan pembunuhan terhadap anggota-anggota keluarganya:

Karena tidak ada makanan, maka saya dan keluarga yang totalnya 51 orang memutuskan untuk pergi ke Aileu untuk mengambil singkong dan ubi manis di kebun orang. Ketika kami mau kembali ke Laututo, Tutuluro [Same, Manufahi] di tengah jalan karena lapar kami memutuskan untuk membakar ubi manis dan singkong yang kami ambil untuk dimakan. Namun tiba-tiba sudah dikepung oleh sekelompok Falintil dan menangkap kami. Semua keluarga saya yang besar diikat di tangan dan di pinggang saling menyambung dan disuruh jalan kaki dari Laututo ke Ailora [Fahinehan, Fatuberliu, Manufahi]. Selama dalam perjalanan para Falintil itu menyiksa keluarga saya selain memukul dengan tangan, dipukul dengan batang jeruk berduri, batang bambu, dan kayu di perut dan punggung, dibakar dengan puntung rokok. Setiba di Ailora semua keluarga saya diikat dan digantung di tiang rumah. Malamnya anggota Falintil mengeksekusi 45 orang keluarga saya, sedang kami 7 orang tidak dibunuh karena salah satu paman saya adalah asistente politik.³⁰⁸

Liquiçá

295. Renal utama di Distrik Liquiçá, menurut penelitian Komisi, adalah Saugata di Subdistrik Maubara. Setidaknya ada 120 orang ditahan di sini selama Renal tersebut beroperasi. Celestino Alves, yang ditangkap pada 15 Oktober 1976 dengan José da Silva bersama 60 orang pendukungnya di Leorema (Bazartete, Liquiçá) akhirnya dibawa ke Renal Saugata. (Lihat bagian mengenai Konflik antara Helio Pina dan José da Silva, pada Oktober 1976, paragraf 243 – 246, di atas.)

296. Alexandrino de Jesus mengatakan kepada Komisi bahwa ia ditahan bersama 48 orang aktivis Fretilin lainnya di Renal Saugata dari Oktober 1977 hingga awal Januari 1978. Alexandrino de Jesus dituduh berencana menyerahkan diri kepada TNI dan telah melakukan kontak dengan Komandan Martinho Soares. Fretilin menahan kelompok ini selama tiga bulan. Para tahanan dituntut melakukan pekerjaan seperti mencabut rumput dengan tangan di area seluas 1,5 hektar agar dapat ditanami jagung. Mereka tidak diberi makan sehingga Alexandrino dan teman-temannya harus mencari makanan sendiri.³⁰⁹

297. Komisi juga menerima laporan yang menunjukkan bahwa ada Renal Maukuruslema di Berdois di Maubara dan pusat penahanan dan penyiksaan di Kamp Sedoze di Kailima, di Desa Laculai (Liquiçá). Agapito dos Santos, misalnya, ditangkap oleh Falintil bersama empat orang lainnya di Berdois (Maubara, Liquiçá) pada 1977. Mereka diikat dengan tali bambu, dipukul dengan potongan kayu, ditendang dengan sepatu bot militer, dan ditahan selama tujuh setengah bulan di Renal Maukuruslema (Maubara) sebelum akhirnya dilepaskan oleh seorang Komandan Falintil José Soares.³¹⁰

298. Sebagian orang tidak ditahan di bangunan atau tempat lain tetapi langsung disiksa di tempat mereka ditangkap. Jorgé Pereira Pinto menuturkan kepada Komisi bahwa ia dituduh melakukan pengkhianatan pada Maret 1976 di Pukemanaru (Desa Manati, Liquiçá) karena konon membawa warga sipil untuk menyerah kepada ABRI. Ia ditangkap oleh dua orang anggota Fretilin yang bernama T209 dan T210. Mereka memukul dan menendangnya hingga ia tersungkur, dan memukulnya dengan Mauser sampai mukanya berdarah dan tubuhnya luka memar dan bengkak. Setelah dipukul, ia diikat pada sebatang pohon selama satu hari sebelum akhirnya dibebaskan.³¹¹

Kekerasan di daerah-daerah Fretilin

Penyiksaan dan bentuk perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat dilakukan di banyak daerah yang dikuasai Fretilin, tidak hanya di *Renal* dan penjara seperti dibahas di atas. Kekerasan sering digunakan sebagai cara untuk menghukum kesalahan yang sungguh atau yang diduga dan untuk menjalankan kuasa seseorang atas orang lain. Beberapa contoh adalah:

Valenti de Sousa Guterres menuturkan bagaimana pada 3 Januari 1976, di Baguia (Baucau), ia dipukul oleh anggota Fretilin dengan sabuk, sehingga mencederai mata kanannya. Kemudian ia ditendang hingga terjatuh dan tak sadarkan diri.³¹² Komandan Fretilin T211 dan anggota T212 menginterogasinya dan hampir membunuhnya ketika Aurelia, ibu Komandan Mau Hudu, turut campur. Ia dilepaskan segera setelah itu.³¹³

Geraldo Pereira menceritakan kepada Komisi bahwa di Molop (Bobonaro) pada 1976, ia dan dua orang lainnya ditangkap dan dianiaya, dipukul dengan senjata dan tangan oleh anggota Falintil. Korban lainnya dipukul kepalanya dengan pisau besar tiga kali sehingga darah mengucur dari kepalanya, sampai ia akhirnya pingsan; korban lain dipotong telinganya. Mereka ditahan selama tiga minggu kemudian dibebaskan oleh Komandan Agustino Espirito Santo.³¹⁴

António Soares mengatakan kepada Komisi bahwa ia ditangkap di Zona Modok di Iliheu (Laclo, Manatuto) pada Maret 1977 oleh anggota Fretilin T213, T214, dan T215. Mereka membawa António Soares ke Zona Modok di mana ia berjumpa dengan lima orang anggota Fretilin lainnya yang ditahan (António Demetrio, João Carceres, Caetano Gusmão, João Harek, dan António Amado) yang tubuhnya bengkak-bengkak karena dibakar dengan batang besi panas.³¹⁵

Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan oleh penguasa pendudukan Indonesia, 1975-1979

Pendahuluan

299. Tahun 1975 sampai 1979 mencatat angka tertinggi orang-orang Timor-Leste yang ditahan sewenang-wenang, disiksa atau yang menderita perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat dibanding tahun-tahun lainnya selama periode mandat Komisi. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi dalam konteks kekacauan dan kekerasan ketika militer Indonesia melakukan invasi dan berangsur-angsur menduduki wilayah Timor-Leste, dan penduduk sipil lari ke gunung-gunung, kemudian ditangkap atau menyerahkan diri. Sejak awal dan selanjutnya, penahanan sewenang-wenang merupakan bagian dari strategi militer untuk menguasai penduduk dan mendapatkan informasi mengenai kekuatan dan kepemimpinan Fretilin/Falintil. Informasi intelijen sering dipakai untuk mencari individu-individu tertentu. Perpecahan lokal dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan menahan orang-orang yang dicurigai sebagai anggota Resistansi atau para pendukungnya.

300. Bagian ini memaparkan sifat dan luasnya penahanan sewenang-wenang, perlakuan kejam, dan penyiksaan, di bawah judul-judul sebagai berikut:

- Profil statistik pelanggaran
- Invasi Dili
- Pengambilalihan wilayah-wilayah lain
- Pengamanan wilayah, 1976-79
- Penyerahan diri, baik pada awal periode maupun penyerahan diri dan penangkapan secara massal, 1978 hingga 1979

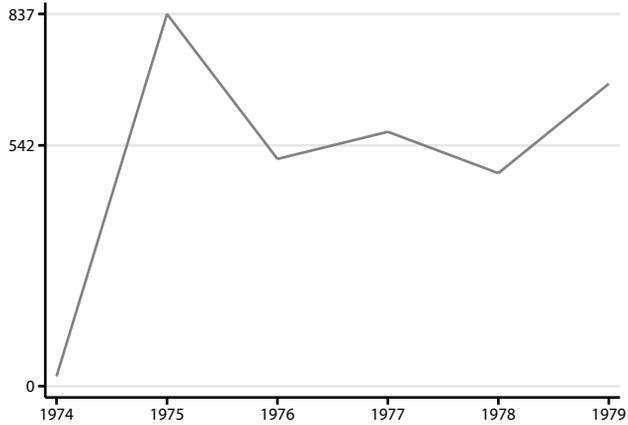
Profil statistik pelanggaran, 1975-1979

301. Komisi mencatat 6.494 penahanan, penyiksaan, perlakuan kejam selama periode ini yang dilakukan oleh militer Indonesia dan pasukan pembantu mereka; 43,45% (6.494/14.491) dari jumlah seluruhnya selama tahun 1975-'79.^{*} Perempuan membentuk 11,32% dari seluruh korban selama periode ini. Angka ini relatif tinggi, mengingat perempuan jarang memainkan peranan penting di dalam pertempuran.

302. Dalam periode ini, seperti ditunjukkan dalam grafik di bawah, terdapat titik puncak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang tinggi pada awal periode 1975 hingga 1976 dan titik tertinggi pada akhir periode 1979. Antara puncak-puncak ini, angka tetap tinggi jika dibandingkan dengan periode-periode lain selama pendudukan Indonesia.

^{*} Perhatikan bahwa untuk 11,19% (1.622/14.491) kasus, pelaku tidak diketahui.

Jumlah tindakan penyiksaan yang dilaporkan, 1974-1979



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah penahanan yang dilaporkan, 1974-1979



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah tindakan penganiayaan yang dilaporkan, 1980-1989



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

303. Puncak-puncak pada 1975 hingga 1976 dan 1979 terjadi bersamaan dengan operasi-operasi militer besar: yang pertama yaitu pada saat invasi (awal Operasi Seroja), dan mencapai puncaknya pada akhir 1975 dan awal 1976. Ini disusul oleh pengeboman dan penyerangan angkatan laut di wilayah timur pada akhir 1978 dan operasi-operasi pembersihan di wilayah tengah pada 1979, yang mengakibatkan penyerahan diri dan penahanan penduduk sipil secara besar-besaran pada tahun-tahun tersebut.

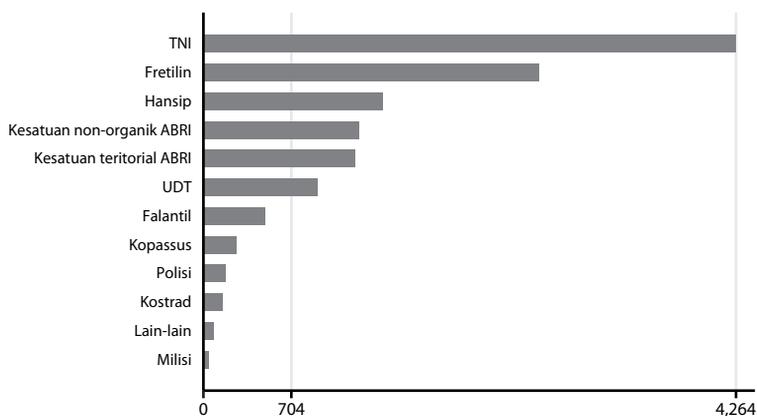
304. Pada periode antara operasi-operasi besar ini, jumlah orang yang ditahan tetap tinggi, dibanding dengan tahun-tahun lain masa pendudukan (lihat grafik pada paragraf 23, di segmen pendahuluan dalam Bagian ini). Penahanan-penahanan ini terjadi saat militer Indonesia terus menggempur Fretilin/Falintil untuk menguasai wilayah dan memaksa para anggota Resistansi keluar dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai dan kemudian menghancurkannya.

305. Pola-pola pelanggaran penahanan, penyiksaan, dan perlakuan kejam, seperti pelanggaran lain baik yang fatal maupun nonfatal selama fase pertama konflik ini, beragam antara satu wilayah dengan lainnya. Sementara kekerasan awal saat invasi Indonesia pada 1975 bersifat paling berat di wilayah barat dan tengah, maka setelah 1976 titik berat pelanggaran nonfatal bergeser ke wilayah timur. Pada 1976, Resistansi mulai menyatukan kekuatan di wilayah-wilayah timur Timor-Leste dan karena itu angkatan bersenjata Indonesia menjadikan wilayah itu pula sebagai sasaran.

Para pelaku

306. Analisis Komisi mengenai para pelaku yang dianggap bertanggung jawab atas penahanan selama periode ini, tecermin dalam grafik di bawah:

Bagan jumlah penahanan, menurut pelaku, 1974-1979



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih dari sekali karena tanggung jawab pelanggaran tersebut terbagi di antara beberapa pelaku

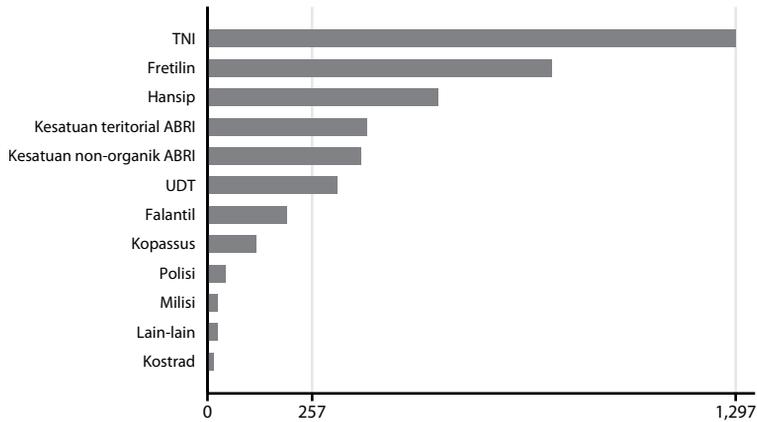
307. Grafik ini menunjukkan bahwa pasukan militer Indonesia melakukan sebagian besar penahanan-penahanan itu. Walaupun perang saudara 1975 menuntut banyak korban di kalangan penduduk Timor-Leste, namun jumlah orang yang menderita akibat pelanggaran nonfatal oleh tentara Indonesia lebih banyak ketimbang yang oleh akibat konflik partai-partai politik 1975. Tentara Indonesia bertanggung jawab terhadap 49,17% (4.393/8.934) dari jumlah semua peristiwa penahanan yang tercatat sepanjang periode invasi; 42,55% (1.328/3.079) untuk kasus penyiksaan; dan 31,19% (773/2478) untuk perlakuan kejam. Dalam sebagian besar kasus, korban hanya mengidentifikasi ABRI/TNI dan tidak menyebutkan satuan pasukan militer yang bertanggung jawab. Pada tahap awal pendudukan, berbagai unsur militer, termasuk nama-nama dan nomor batalion, belum dikenal oleh mayoritas orang Timor-Leste. Banyak penahanan awal terjadi dalam situasi pergolakan dan kekacauan, saat militer menyerang desa-desa atau kelompok-kelompok masyarakat, tidak seperti periode selanjutnya ketika batalion-batalion sudah menetap dalam satu wilayah tertentu dan dapat dikenal oleh komunitas.

308. Meskipun demikian jelaslah bahwa satuan-satuan teritorial, termasuk satuan organik dan nonorganik, juga terlibat dalam penahanan terhadap para tersangka.* Pasukan Khusus (Kopassandha/Kopassus) juga melakukan penahanan. Selain militer sendiri, orang-orang Timor-Leste yang bekerja untuk lembaga-lembaga

* Satuan teritorial adalah satuan non-tempur yang bertanggung jawab atas wilayah geografis tertentu dan berada di bawah struktur teritorial dari tingkat komando subdistrik hingga tingkat nasional. Satuan teritorial organik terdiri atas tentara-tentara setempat yang direkrut secara lokal, sedangkan satuan teritorial nonorganik terdiri atas batalion-batalion teritorial dari provinsi-provinsi di Indonesia. Satuan-satuan tempur tidak dibatasi secara geografis dan berada di luar struktur komando teritorial. Untuk informasi lebih lanjut lihat Bagian 4: Rezim pendudukan, pada segmen tentang ABRI.

pertahanan sipil juga terlibat dalam cukup banyak kasus penahanan selama periode ini. Bukti-bukti kualitatif menunjukkan bahwa banyak pelanggaran ini dilakukan bersama dengan militer. Pola-pola ini serupa dengan kejadian-kejadian penyiksaan yang dilaporkan dalam periode yang sama.

Bagan jumlah penyiksaan, menurut pelaku, 1974-1979



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Penahanan selama invasi

309. Militer Indonesia memulai penyerbuannya ke kota-kota di dekat perbatasan Timor Barat pada September 1975 dan kemudian melancarkan invasi ke Dili pada 7 Desember 1975. Invasi Dili menandakan awal Operasi Seroja (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Setelah menguasai Ibukota Dili dan Baucau dua hari kemudian, pasukan bergerak untuk menguasai wilayah-wilayah strategis.

310. Setiap kali militer masuk ke wilayah baru, pola umum penahanannya sama. Pasukan militer menahan penduduk sipil dan para pejuang, baik yang ditangkap maupun yang menyerah. Di beberapa tempat terjadi penahanan besar-besaran karena militer ingin menguasai masyarakat lokal dan untuk mengidentifikasi anggota-anggota atau pendukung Fretilin/Falintil yang mempunyai hubungan dengan Resistansi. Di tempat-tempat lain, militer menangkap kelompok-kelompok keluarga atau individu-individu yang tidak sempat melarikan diri atau yang tertangkap saat kembali untuk mencari makan. Penahanan memiliki beberapa tujuan:

- Memisahkan anggota-anggota Resistansi dari masyarakat umum
- Merupakan sarana untuk memperoleh informasi strategis mengenai Resistansi
- Berfungsi sebagai hukuman atas keanggotaan dalam, atau dukungan terhadap, Resistansi.

Agustus – November 1975

311. Antara Agustus dan November 1975, satuan-satuan Pasukan Khusus Indonesia bersama Partisan Timor-Leste melakukan penyerangan ke wilayah barat yang dimulai dari Atsabe (Ermera), Bobonaro (Bobonaro), dan Suai (Covalima) pada 14 September; Batugade (Bobonaro) pada 8 Oktober; Balibó (Bobonaro) pada 15 Oktober; serta Atabae (Bobonaro) pada 20 November. Pejuang-pejuang Fretilin ditangkap dan ditahan selama perang melawan pasukan Indonesia. Alvaro Tavares menceritakan kembali:

Pada tahun 1975, seorang Komandan Segunda Linha, T216, memaksa kami untuk melakukan penyerangan di Balibó melawan pasukan Indonesia. Saya bersama teman-teman lainnya terlibat dalam baku-tembak dengan pasukan Indonesia di Balibó mulai dari pagi hari hingga sore hari. Karena kekuatan kami tidak seimbang dengan ABRI, kami semua kembali lagi ke tempat kami bernama Damalaran [Balibó, Bobonaro]. Sampai di tempat ini, pasukan Indonesia dengan mobil tank militer tetap melakukan penyerangan hingga adik saya Talo Bere ditembak mati. Setelah adik saya meninggal Komandan T216 menyerah kepada pasukan Indonesia dan bersama pasukan Indonesia datang menangkap kami di Atabae. Kemudian kami ditangkap dan dikurung di Rairobo [Atabae]. Saat itu kami tidak dikasih makan dan tidak dikasih obat, sehingga kami hanya makan daun-daunan. Anak saya bernama Januario Tavares meninggal dunia di tempat tersebut karena kelaparan.³¹⁶

312. Kasus-kasus penahanan penduduk sipil dari periode ini jarang terjadi. Ini menjadi petunjuk bahwa penahanan sipil tidak merupakan bagian dari strategi penyerbuan saat itu. Dalam sebuah kasus dari Subdistrik Atsabe, Marciana da Graça menggambarkan bagaimana empat penduduk sipil, Mau Butar, Berleki, Beremau, dan Mausiso, ditangkap oleh Batalion 403 di Coileki di Desa Babo Leten (Atsabe) dan dibawa ke Kota Atsabe. Tentara bersama seorang Komandan Partisan, T217, kemudian membawa para korban ke Desa Malabe (Atsabe) dan membunuh mereka.³¹⁷

313. Demikian juga, dalam sebuah kasus dari Atsabe (Bobonaro), Guilhermina Gusmão mengatakan kepada Komisi:

Pada tahun 1975 [saya lupa bulan] Indonesia datang dan menyerang kampung Kolibau [Atabae] dengan tank-tank dan menembaki kami secara serampangan. Saya tidak tahu satuan yang mana, sebab saya hanyalah masyarakat kecil. Karena kami takut mati saya sama ibu dan bapak lari bersama. Saat itu pesawat-pesawat mulai menyerang kami dari Aidabaleten [Atabae], kemudian kami lari sembunyi di gua dan setelah itu ke Lou-Mate...dan kemudian sembunyi dekat Sungai Aidabalete. Di sana mereka datang ke tempat persembunyian kami dan menangkap kakak saya bernama Mateus Maubere. Mereka yang

menangkap kakak saya adalah gabungan militer dan Partisan orang Timor-Leste. Mereka membawa dia ke Aipusrah [Atabae] kemudian mengikat dia pada pohon jeruk dan menembak dia mati. Kami lihat dari jauh.³¹⁸

Dili

Invasi

314. Pada hari terjadinya invasi terhadap Dili, militer menangkap dan menahan para pejuang dan penduduk sipil yang tidak sempat meninggalkan kota. Sebagian dibawa ke dermaga di Pelabuhan Dili dan dieksekusi (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Beberapa anggota Resistansi menyerah kepada pasukan invasi setelah sadar bahwa mereka tidak dapat bertahan lagi. Marcelo da Costa Pereira, Komandan Operasi Fretilin Sektor A, mengatakan kepada Komisi bahwa ia dan empat orang lainnya, Luis, Sebastião, Celestino, dan Simão, menyerah setelah amunisi mereka habis. Kelompok ini ditangkap kemudian dibawa ke pelabuhan. Di sana mereka disiksa oleh para penangkapnya:

Kami dibawa ke markas komando dan setelah itu ke pelabuhan naik tank ABRI. Sampai di sana kami ditelanjangi, hanya memakai celana dalam selama 15 hari. Kemudian kami dibawa ke pusat penahanan Tropical dan [kemudian ke] Penjara Balide [Comarca]. Saat kami sampai di penjara, kami diinterogasi, dipukuli dengan besi, diselomot dengan rokok, disetrum, dan kaki kami ditindih dengan kaki kursi.³¹⁹

315. Beberapa pejuang Fretilin/Falintil ditangkap setelah lari dari pertempuran. Luis Sarmiento serta 30 orang lainnya, yang dipersenjatai Rogério Lobato untuk mempertahankan wilayah Palapaço di Motael (Dili), sadar bahwa jumlah mereka terlalu sedikit untuk menghadapi militer Indonesia, sehingga mereka melarikan diri untuk bersembunyi di pelabuhan udara. Seminggu kemudian, prajurit Kopassandha menangkap mereka karena seorang informan, T218, memberitahu militer tempat mereka bersembunyi. Perlakuan terhadap Luis Sarmiento dan teman-teman sama dengan perlakuan yang diterima oleh Marcelo da Costa Pereira:

Tangan kami diikat di belakang punggung, kemudian [kami diikat] satu orang ke yang lain. Kemudian kami dibawa ke pelabuhan. Sampai di sana kami dilempar ke tanah dan kami dilindas sepeda motor, dua kali. Kemudian mereka membawa kami ke [pusat penahanan] Tropical dan dipukuli, kami disiram air panas, kami diselomoti dengan rokok, dan kami diberi makan jagung rebus yang sudah membusuk. Saya ditahan di Tropical selama satu tahun. Pada tahun 1977 saya dipindah ke Penjara Balide.³²⁰

316. Walaupun sebagian besar penduduk Dili telah lari dari kota saat invasi terjadi, mereka yang tinggal menjadi rentan untuk ditahan militer dengan sewenang-wenang. Marcus Valaderes dari Beto, suatu daerah di Dili, di belakang pelabuhan udara Comoro, mengatakan kepada Komisi tentang keluarganya yang ditahan di rumah mereka:

Waktu militer Indonesia tiba dengan pesawat saya lihat banyak orang terjun dari pesawat. Sekitar subuh di lapangan udara Comoro, saya dan keluarga saya tidak sempat melarikan diri sebelum kami dikepung. Pada jam 6 pagi kami ditangkap [saya tidak tahu oleh satuan yang mana]. Selama tiga bulan kami tidak boleh pergi keluar rumah, kecuali ke kamar kecil. Jika kami meninggalkan rumah kami akan ditembak.³²¹

317. Mereka yang melarikan diri ke pergunungan dikejar oleh tentara dan banyak yang tertangkap di sekitar Dare, di bukit-bukit di atas Dili. Sebagian dari mereka yang tertangkap ditahan serta menerima perlakuan kejam dan penyiksaan. Elda Guterres menceritakan penangkapan anak laki-lakinya, seorang mantan tentara Portugis di Timor-Leste:

Pada tanggal 7 Desember 1975, banyak orang lari ke gunung dan hutan karena invasi ABRI. Anak saya Armindo sembunyi di Dare. ABRI menyerang dari berbagai arah sekaligus dan banyak yang ditangkap... termasuk anak saya Armindo. Mereka dibawa ke Dili dan dimasukkan ke sel di Penjara Balide. Selama di penjara, Armindo dipukuli, disetrum dan disiksa dengan berbagai cara. Setelah itu seorang tentara [Partisan] bernama Marcelino Ximenes, sepupu saya, meminta ABRI agar Armindo dibawa ke rumah sakit. [ABRI] setuju dan dia dibawa ke rumah sakit Wirahusada [Dili], tetapi meninggal pada tanggal 24 Juli 1976.³²²

Hari-hari setelah invasi

318. Penelitian Komisi menunjukkan bahwa setelah pendudukan Dili, militer Indonesia mulai mengidentifikasi anggota-anggota Fretilin dan kemudian menahan, menginterogasi, dan/atau menghukum mereka. Dalam proses ini, ABRI menahan penduduk sipil atau membatasi gerak mereka. Penduduk sipil disuruh berkumpul di beberapa lokasi, yang paling penting adalah: Gedung Intendência (saat laporan ini ditulis gedung pusat kebudayaan Uma Fukun) dan Gedung Sota (*Sociedade Oriental do Transportes e Armazens*, sebuah bangunan perusahaan perdagangan Portugis).

319. Pada 7 Desember militer Indonesia memerintahkan ratusan penduduk sipil untuk tidur di lantai Gedung Intendência (dulu Kodim Dili dan saat ini Uma Fukun), yang terletak di sebelah timur Kantor Gubernur (saat laporan ini ditulis disebut *Palácio do Governo*). Pada pagi hari 8 Desember penduduk sipil ini diperintahkan berjalan di sepanjang pantai menuju daerah pelabuhan dan di sana mereka disuruh menunggu di depan Hotel Timor. Sore itu mereka dan penduduk sipil lainnya dibawa ke daerah Pantai Kelapa/Kampung Alor. Sore harinya 127 orang etnis Cina diizinkan kembali ke rumah mereka, tetapi sejumlah besar orang Timor-Leste diperintahkan tetap tinggal di daerah itu.³²³

320. Pada 8 Desember militer Indonesia memulai proses pendaftaran penduduk Dili dan membagi-bagi kartu identitas. Mereka meminta penduduk melapor ke sebuah gedung bekas milik perusahaan perdagangan grosir dan eceran Portugis, gedung Sota di daerah Bidau Lecidere. Di gedung Sota, setiap orang diwajibkan mengisi formulir dengan data pribadi, termasuk afiliasi politik mereka, untuk mendapat kartu identitas. Orang-orang yang menyatakan diri sebagai Fretilin langsung ditangkap. António Caleres Junior menjelaskan proses itu:

Pada tanggal 12 Desember, kami semua harus pergi ke Sota untuk mendapat kartu keamanan [pendaftaran]. Lewat mikrofon [di atas mobil yang berkeliling Dili], [mereka] bilang, bahwa setiap orang harus pergi atau menanggung akibatnya. Semua orang pergi untuk mendapat kartu dan kemudian membawanya pulang, karena kartu itu diperiksa di jalan. Kami harus mengisi formulir sebelum mendapat kartu dan pada formulir tersebut terdapat beberapa hal yang harus kami ungkapkan, seperti kita berasal dari partai mana. Juga ada terdapat beberapa pemeriksaan. Kalau mereka tidak percaya, mereka akan menangkap kita [dan membawa kita] ke suatu tempat yang tidak kita ketahui.³²⁴

321. Francisco Calçona ditangkap di Sota karena keanggotaannya dalam Fretilin. Pada awalnya dia ditahan di Sota (saat laporan ini ditulis, gedung ini adalah Dili Trade Center), kemudian dipindah ke Tropical pada 19 Desember. Dari Tropical, dia dibawa ke bangunan Sang Tai Hoo (sebuah toko di Colmera) untuk diinterogasi. Selama interogasi, dia dipaksa melompat dengan sebuah tongkat kayu yang diapit di belakang lututnya dan lubang hidungnya dimasuki rokok menyala. Kemudian para interogator menyuruh dia menjewer telinganya sendiri dan mereka menulis “hau Fretilin” (saya Fretilin) di dahinya dengan cat. Dia juga disuruh memakai helm dan mereka memukul kepalanya dengan besi.³²⁵

322. António Caleres, untuk menyelamatkan diri, menulis bahwa dia anggota partai Apodeti:

Kami melihat orang-orang Apodeti tampil ke depan dan mereka mengatur segala sesuatunya dengan militer. Mereka juga melakukan penangkapan-penangkapan. Namun ada juga orang-orang Apodeti yang baik hati, yang memberitahu kami tentang keadaan dan menyuruh kami menuliskan Apodeti di formulir, jadi kami semua melakukannya. Tidak terlalu buruk untuk menulis KOTA atau Trabalhista, tetapi jika kami menulis Fretilin, mereka pasti akan menangkap dan membawa kami ke suatu tempat. Saya menulis Apodeti agar saya bisa mendapat kartu Apodeti. Proses penyaringan di gedung Sota diawasi oleh para pemimpin partai Apodeti yang telah melapor ke Sota sehari sebelumnya.³²⁶*

* Labut Melo, anggota senior Apodeti, mengatakan bahwa dia melapor ke Hotel Timor pada 8 Desember, bukan ke gedung Sota, dan di sana dia menerima senjata dari para pejuang Fretilin yang telah menyerah.

323. Filomeno Gomes menceritakan bagaimana dia dan para pemimpin Apodeti lainnya, termasuk pemimpin partai Arnaldo dos Reis Araújo, melarikan diri dari penahanan Fretilin pada hari invasi dan pergi ke gedung Sota. Hari berikutnya, 8 Desember 1975, “[Kolonel] Kalbuadi dan [Mayor Jenderal] LB Moerdani datang ke gedung Sota dan bertemu dengan kami”. Beberapa kelompok kemudian ditunjuk untuk mengawasi proses penyaringan penduduk, karena mereka dianggap lebih dapat mengidentifikasi pendukung Fretilin daripada tentara-tentara Indonesia.

324. Sebuah pola jelas dalam kesaksian korban kepada Komisi adalah peran para anggota partai Apodeti dan UDT dalam memberikan informasi kepada militer, mengenai latar belakang orang-orang Timor-Leste lainnya pada awal periode pendudukan ini.

325. Kadang ini menguntungkan beberapa individu. Maria Olandina Isabel Cairo Alves mengatakan kepada Komisi:

Pada 13 Desember 1975, saya ditangkap dan dibawa ke Sota, tempat yang dulu digunakan oleh teman-teman dari partai Apodeti, oleh pasukan baret merah. Di sana saya bertemu dengan [calon] Gubernur Arnaldo dan Sersan Vicenti Tilman...mereka berdua sempat mengatakan kepada ABRI, bahwa “Nia laos ema aat, nia laos komunista, hare nia, interoga nia maibe laele halo susar nia”. [Dia bukan orang jahat, bukan juga komunis, jaga dan interogasi dia tapi jangan buat dia menderita].³²⁷

326. Dalam banyak kasus lainnya, anggota-anggota Apodeti atau UDT menunjukkan anggota-anggota Fretilin kepada militer Indonesia, menyertai tentara dalam penangkapan anggota-anggota Fretilin, atau bahkan mereka sendiri yang menangkap mereka.³²⁸

327. Misalnya, Lino Soares mengatakan kepada Komisi bahwa pada 10 Desember 1975 empat anggota Kopassandha bersama T219 (seorang anggota Apodeti dan kepala Desa Bidau Santana) menangkap ayah Lino Soares, Jeferino Soares, dan temannya, Francisco da Silva, di Bidau Santana (Dili Timur, Dili). Mereka mendengar bahwa Jeferino menyembunyikan bendera Timor-Leste. Setelah mereka mengikat tangan kedua korban itu, militer mulai memukuli mereka dan membawa mereka ke pos komando dan di sana Jeferino dipukuli lebih parah. Mereka ditahan semalam dan dilepaskan keesokan harinya.³²⁹

328. Francisco Soares Henrique, anggota Fretilin yang melawan pasukan invasi pada hari invasi, juga ditangkap di rumahnya di Bidau Santana pada 10 Desember 1975. Sekali lagi, T219 datang ke rumah korban dengan anggota-anggota militer. Mereka menginterogasi Fransisco, adik laki-laknya serta ayah mereka, mengenai senjata-senjata yang ditemukan di rumah itu. Mereka kemudian dituduh sebagai komunis dan ditangkap kemudian dibawa ke sebuah toko di Colmera dan kemudian ke komando militer di Dili, sampai tanggal 17 Desember saat mereka dipindah ke Comarca.³³⁰

329. Acaçio Tau Pelo adalah seorang anggota Fretilin yang juga tinggal di daerah Bidau Santana saat invasi. Ia menceritakan kepada Komisi:

Pada tanggal 12 Januari 1976 tiga orang Apodeti, yakni T220, T221, dan T222, menangkap saya di rumah lalu membawa saya ke Kodim Dili. Di markas ini, saya diinterogasi dari jam 9 pagi sampai 12 siang dan yang menginterogasi saya adalah T223. Saya ditangkap karena saya anggota Fretilin. Setelah interogasi, saya dipindahkan dari Kodim ke Tropical dan diinterogasi lagi oleh intel dan saya disiksa lagi seperti pemukulan dengan menggunakan ikat pinggang. Pada tanggal 15 April 1976 saya dibebaskan dan saya mencari keluarga saya, kemudian saya bergabung dengan Komite Fretilin Zona Utara Tengah di bawah Alarico Fernandes.³³¹

Pusat-pusat penahanan di Dili

Dalam beberapa hari invasi Indonesia di Dili, pasukan-pasukan telah menguasai gedung-gedung di Pelabuhan Dili³³² dan gedung Sota. Tidak lama kemudian mereka juga mengambil alih bekas penjara Portugis di Balide (Dili) yang dikenal sebagai Comarca,[†] gedung-gedung swasta Sang Tai Hoo[‡] dan Tropical,[§] dan sejumlah rumah di daerah Farol (Motael, Dili). Perlakuan kejam dan penyiksaan dilaporkan secara luas oleh mantan tahanan di semua tempat ini, tetapi berbagai pernyataan menunjukkan bahwa setiap lokasi mempunyai tujuan berbeda. Dua dari lokasi penahanan utama pada tahun-tahun awal pendudukan adalah Penjara Comarca di Balide dan gedung Sang Tai Hoo di Colmera. Comarca tetap digunakan sampai akhir pendudukan pada 1999.

Comarca

Salah satu pusat penahanan yang paling kejam bagi tahanan politik selama masa pendudukan Indonesia adalah Comarca, yang juga dikenal sebagai Penjara Balide. Comarca tersebut didirikan sebagai penjara resmi oleh pemerintah kolonial Portugis pada 1963[§] dan selama Konflik Bersenjata Internal digunakan oleh Fretilin untuk

* Juga disebut para deponen sebagai Penjara Balide karena terletak di daerah Balide, Dili.

† Sang Tai Hoo dilaporkan digunakan sejak masa pendudukan sampai 1980, walaupun mungkin masih digunakan pada 1981.

‡ Pusat Penahanan Tropical. Lihat Pernyataan HRVD: 5092; 4881; 5730; 7011; 5725; 3742; 3607; 5683; 0175; 0113; 3780; 3752; 5050; 0041. Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada CAVR menunjukkan bahwa Tropical digunakan terutama pada 1975-76, kemudian diduduki lagi oleh milisi Aitarak pada 1999 dan digunakan untuk menahan para pendukung kemerdekaan.

§ *Plano de Fomento*, sebuah dokumen resmi pemerintah Portugis, 1963. Dokumen itu mengenai fase pembangunan penjara Comarca Dili, sebuah instalasi layanan publik.

menahan tawanan UDT dan Apodeti.* Dari Januari 1976, militer Indonesia menggunakan penjara tersebut sebagai pusat penahanan jangka panjang dan penjara resmi di Timor-Leste. Penjara ini dihuni oleh tahanan kriminal dan politik,† yang kebanyakan, pada 1970-an, ditahan selama beberapa tahun tanpa tuntutan atau pengadilan.‡

Comarca terdiri atas enam blok sel dan delapan sel baja perorangan, yang dikenal para tahanan sebagai 'sel gelap'.§ Sel-sel gelap itu berukuran panjang 2,02m x lebar 2,72m x tinggi 3,1m dan hanya memiliki sedikit ventilasi. Para tahanan hanya mengenakan pakaian dalam, tanpa cahaya atau udara segar, sering dipadati dengan tahanan lain, sehingga hanya ada ruang untuk berdiri. Sel lainnya, yang juga dikenal sebagai 'sel Maubutar', digunakan untuk menyekap tahanan dalam isolasi. Saturnino Belo, seorang tahanan pada 1990-an menceritakan pengalamannya di dalam sel gelap:

Sel tersebut tidak seperti sel biasanya...Sementara berada dalam sel tersebut kita menjadi sangat merasa tertekan, karena tidak bisa berpakaian, tidak bercelana panjang, melainkan hanya bercelana dalam. Walaupun tidur di atas lantai tetapi kita tetap berkeringat... Juga berbau busuk. WC rusak dan di dalam sel itu, ketika kita masuk pertama kali, kita akan menjadi pusing dan demam [paludismo].

Saya tidur malam hari tetapi kalau malam sudah berlalu kita tidak tahu. Kita baru tahu kalau hari sudah pagi karena ayam berkokok dan mereka membagi nasi. Mereka memberi nasi pada pagi, siang, dan sore hari...Tetapi kalau mereka tutup pintu, kita tidak tahu apa pagi atau malam. Di tempat itu selalu gelap. Malam hari, kita berdoa. Kalau kita merasa ngantuk kita tidur. Tetapi kita tidak bisa mengikuti sinar matahari.³³³

Pada tahun-tahun awal pendudukan, sampai pada pertengahan dasawarsa 1980-an, kondisi tempat penahanan sangat buruk.¶

* International Committee of the Red Cross, *East Timor Relief Operation*, 16 September 1975. E-mail dari Noel Barrow, petugas arsip Australian Red Cross, Kantor Nasional, Melbourne kepada CAVR, 8 Oktober 2004. Oleh karena kerahasiaan catatan-catatan ICRC berkenaan dengan kunjungan organisasi ke penjara-penjara, tidak ada perincian yang tersedia.

† Wawancara dengan Justino Mota, Lisabon, 3 – 4 Juli 1984. Salah satu dari tahanan pertama yang ditahan di penjara itu yang melaporkan kepada Komisi adalah Venancio Gomes. Dia langsung ditangkap setelah terjadinya invasi dan pertama-tama ditahan di Tropical sebelum kemudian dipindahkan ke Comarca pada 1976. Dia ditahan di sana sampai 1979. Amnesty International, *Statement of Amnesty International's Concerns in East Timor*, ASA 21/09/83.

‡ Amnesty International, ASA 21/09/83, hal. 61. Sampai pada pertengahan 1980-an, sebagian besar tahanan dituntut dan diadili, walaupun mereka ditahan pada awal periode penahanan tanpa tuntutan. [Lihat Bab 7.6 : Pengadilan Politik].

§ 'sel gelap', 'sel escura', atau 'sel nakunun' (semua berarti sel gelap).

¶ Pada 1983, Palang Merah Internasional (ICRC) mulai mengunjungi para tahanan di Comarca dan menganjurkan perbaikan kondisi penjara. Satu penjara resmi lain juga dibangun di Becora (Dili) sekitar 1986, disusul oleh pembangunan penjara-penjara di Baucau (Baucau), Gleno (Ermera), dan Maliana (Bobon-

Penjara tersebut penuh sesak karena banyaknya orang yang ditangkap dalam operasi-operasi militer pada tahun-tahun ini.* Hal ini menyebabkan kondisi kekurangan makan dan sanitasi yang buruk. ICRC melaporkan bahwa ketika mereka mulai menimbang berat badan para tahanan sekitar 1983 - 1984, berat badan tahanan tercatat sampai serendah 30 kg.³³⁴ Manuel Fernando Oliveira Neves, yang dikirim ke Comarca bersama 16 orang lainnya pada 12 Juni 1980, setelah serangan Marabia, menceritakan kondisi tersebut:

*Kami bertujuh-belas dijejalkan dalam satu sel yang sesak, yang bau, dan demikian juga WC-nya, tinja berceceran di mana-mana. Kami tidur di atas kotoran manusia yang sudah mengering dan juga kotoran kita sendiri, karena kita tidak punya alas untuk tidur.*³³⁵

Penyiksaan dan perlakuan kejam selama penahanan di Comarca berkali-kali dilaporkan para korban dalam pernyataan mereka kepada Komisi, terutama pada tahun-tahun awal pendudukan. Interogasi juga dilakukan di Comarca, tetapi para tahanan lebih sering dibawa ke pusat-pusat interogasi (dan penyiksaan) khusus, seperti Sang Tai Hoo. Penghilangan para tahanan Comarca juga sering terjadi terutama pada malam hari.

Sang Tai Hoo

Sang Tai Hoo adalah sebuah toko Cina selama masa Portugis di daerah Colmera, yaitu pusat pertokoan di Dili. Gedung itu memiliki dua lantai; lantai bawah terdiri atas dua ruangan dan sebuah garasi dan di lantai atas hanya terdapat dua ruangan sangat kecil dengan ventilasi yang sangat buruk. Ruang di lantai bawah masing-masing menampung sekitar 20 orang tahanan³³⁶ dan jika ruang-ruang ini penuh, para tahanan disekap di lantai atas, tiga orang tahanan dalam satu ruangan. Menurut António Caleres Junior ada kalanya sampai 200 orang ditahan di Sang Tai Hoo.³³⁷ Kondisi di sana sangat tidak higienis dan tahanan harus buang air di toilet dalam ruangan tersebut.³³⁸ Para tahanan membersihkan toilet itu sendiri. Maria Fatima Maia, yang ditahan di Sang Tai Hoo, mengenang kembali:

.....
aro) pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal dasawarsa 1990-an. Komisi tidak dapat menyatakan secara pasti tahun selesainya pembangunan penjara-penjara ini karena hancurnya catatan-catatan pemerintah Indonesia pada 1999.

* Kapasitas resmi penjara itu adalah 200 tahanan. [Pernyataan seorang pegawai sipil Indonesia kepada Komisi HAM PBB, Subkomisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, dikutip dalam Amnesty International, ASA 21/09/83, hal.62.] Pada pertengahan 1977 perkiraan jumlah tahanan di Comarca adalah 500 orang [Wawancara, Justino Mota, 3 - 4 Juli 1984] dan menurut Amnesty, angka ini meningkat hingga 700 orang sampai pada 1979. [Amnesty International, hal.61] Penguasa penjara antara 1980 dan 1986 mengatakan "lebih dari 500 tahanan yang dijejalkan ke dalam penjara ini setelah serangkaian operasi militer" [Peter Carey, wawancara dengan Ian Dion, Jawa Barat, 3 Januari 2004].

*Mereka memindahkan saya ke sel lain yang kondisinya sangat buruk—airnya tersedumbat banyak lendir dan kotoran manusia...saya tidak bisa melihat matahari, saya hanya bisa melihat melalui ventilasi, tetapi mereka juga menutup ventilasi itu.*³³⁹

Bagaimanapun, Sang Tai Hoo terutama lebih dipakai sebagai pusat interogasi dan penyiksaan ketimbang tempat untuk menahan para tahanan. Tahanan dari pusat penahanan lain seperti Comarca dibawa ke Sang Tai Hoo untuk diinterogasi. Misalnya, Moises Mesquita de Almeida, seorang anggota Falintil, dan kakak laki-lakinya, Manuel Soares, ditangkap pada November 1976 dan ditahan di Comarca, tetapi kemudian dibawa ke Sang Tai Hoo untuk diinterogasi. Moises mengatakan kepada Komisi bahwa pada 12 November 1976, selama tiga hari interogasi oleh seorang kolonel Indonesia, T224, dia dikenai penyiksaan dan penganiayaan, termasuk “dipukuli, ibu jari kaki saya ditindih di bawah kaki kursi yang diduduki oleh dua anggota ABRI, ditendang di muka yang membuat gigi saya hampir copot, telinga saya dipukul sampai berdarah dan saya menjadi tuli, dan bentuk-bentuk siksaan lainnya.”³⁴⁰

Francisco Soares Henrique mengatakan kepada Komisi:

*Setelah satu bulan di Tropical kami dipindahkan ke penjara Balide. Di sana setiap hari Senin kami dikeluarkan dan dibawa ke Sang Tai Hoo untuk diinterogasi. Di Sang Tai Hoo kami diperlakukan tidak manusiawi, yakni dipaksa untuk minum air kencing ABRI, dipukul hingga berdarah. Kemudian dipaksa berdansa dengan tahanan wanita [Maria Goreti, Maria Soares, Maria Pereira, Elda Saldanha dan Merita Alves] yang hanya bercelana dalam dan BH. Saya ditahan selama tiga tahun dan baru dibebaskan pada tahun 1978.*³⁴¹

Praktik-praktik penyiksaan di Sang Tai Hoo sangat kejam dan memalukan. Sebagian besar interogasi dilakukan di pojok sebuah koridor, agar tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Di lantai yang sama ada sebuah kantor administrasi, yang kadang juga digunakan untuk interogasi.³⁴² Para penjaga sengaja tidak mengunci pintu-pintu sel agar mudah membawa pergi tahanan. Maria Fatima Maia (1981) mengatakan pada Komisi bahwa:

*Saya selalu dipanggil mendadak untuk interogasi pada malam hari, dari jam tujuh malam sampai tengah malam. Setelah diinterogasi saya dibawa ke sel lain yang ada WC-nya. Pagi hari, mereka membawa saya keluar dan memasukkan saya ke gudang yang hanya punya satu lubang di pintu. Setiap pagi mereka memberi makan lewat lubang di pintu itu.*³⁴³

Sang Tai Hoo tidak dilaporkan dalam pernyataan-pernyataan setelah 1981; barangkali merupakan petunjuk bahwa pusat ini tidak lagi digunakan untuk interogasi dan/atau penyiksaan.

Pola awal penahanan

330. Bahkan pada awal periode ini, pola-pola praktik penahanan mulai terlihat jelas. Dua pola yang ada, dibahas dalam boks di atas, adalah penggunaan lokasi penahanan resmi dan tidak resmi dan dengan menggunakan lokasi-lokasi yang berbeda untuk tujuan yang agak berbeda-beda; misalnya Comarca digunakan untuk penahanan jangka panjang dan Sang Tai Hoo atau Tropical untuk interogasi dan penyiksaan. Komando-komando dan basis-basis militer juga sering digunakan untuk menahan tahanan, kadang sampai beberapa tahun. Pola ini berlangsung selama periode pendudukan.

331. Sebuah pola lain yang muncul dan juga terlihat pada periode berikutnya adalah pemindahan para tahanan yang sering terjadi antara tempat penahanan yang berbeda. Kadang para tahanan dipindahkan ke beberapa tempat dalam satu malam. Pola ini, yang dimulai pada awal periode pendudukan, berkali-kali dilaporkan dalam pernyataan-pernyataan yang diterima oleh Komisi sampai pada akhir periode mandat.

332. Satu penjelasan atas perlakuan terhadap para tahanan yang seperti ini mungkin karena tempat-tempat penahanan yang berbeda itu memang digunakan untuk tujuan yang berbeda.³⁴⁴ Juga, interogator yang berbeda mencari informasi yang berbeda atau informasi yang sama dengan cara yang berbeda. Seorang mantan tahanan menjelaskan bahwa jika interogator yang satu tidak memperoleh informasi yang diinginkan, tahanan itu akan dikirim kepada interogator yang lain yang menggunakan cara-cara yang lebih kasar lagi.* Sebuah pola umum adalah membawa para tahanan pertama-tama ke pusat penahanan informal seperti Tropical³⁴⁵ dan Sang Tai Hoo, yang terutama digunakan untuk interogasi dan penyiksaan, sebelum mengirim mereka ke Comarca.† Sebuah penjelasan lain adalah bahwa pemindahan seseorang tahanan yang terjadi berkali-kali, terutama pada malam hari, merupakan cara untuk mengintimidasi serta membuat bingung korban dan menanamkan rasa takut.

333. Pengalaman Francisco Soares Henrique merupakan satu contoh tentang pola ini. Dia mengatakan kepada Komisi bahwa setelah penangkapannya oleh ABRI pada 10 Desember 1975, pertama-tama dia dibawa ke sebuah tempat bekas toko, yaitu Toko Lay, sampai 12 Desember. Kemudian dia dibawa ke markas militer Dili sampai 17 Desember dan setelah itu dipindah ke Tropical dan disekap di sana selama satu bulan. Baru setelah itu dia dipindah ke Comarca dan ditahan selama tiga tahun (lihat boks di atas: Pusat-pusat penahanan di Dili, setelah paragraf 329).³⁴⁶

* Chiquito Gutierrez ditahan pada 1996 dan dipindah antara beberapa tempat penahanan. Dia menjelaskan: "Alasan mereka memindahkan saya...pertama, karena mereka tidak mendapatkan cukup bukti yang kuat untuk membawa saya ke pengadilan untuk disidang; kedua, mereka mengira bahwa SGI Colmera, karena mereka lebih kasar, bisa menyiksa saya untuk mendapat bukti yang kuat; ketiga, agar mereka dapat menyiksa saya lebih berat supaya saya menyebutkan nama-nama anggota dan pejuang Klandestin di hutan." Alasan-alasan ini—untuk memperoleh bukti keterlibatan yang lebih kuat dan untuk memperoleh nama orang-orang lain yang terlibat dalam Resistansi—semua diterapkan pada dasawarsa 1970-an. [CAVR, wawancara dengan Chiquito da Costa Guterres, Dili, 14 Juni 2004.]

† Lihat, sebagai contoh, Pernyataan HRVD 0175; 0113; 3752; 4881; 3780; 5050. Militer Indonesia memanfaatkan para tahanan untuk merenovasi Gedung Comarca pada awal 1976.

334. Pada saat invasi, Maria Olandina Isabel Caeiro Alves adalah penyiar Radio Maubere dan istri seorang anggota Falintil. Dia bercerita kepada Komisi, pada 13 Desember 1975 tentara menangkap dia di kediaman Uskup Dom José Joaquim Ribeiro, dan membawanya ke Gedung Sota. Malam itu dia dibawa ke beberapa tempat di Farol dan di sana dia ditahan, juga di tempat-tempat lain di mana dia diinterogasi dan disiksa.³⁴⁷

Kemudian mereka membawaku ke Farol [Senopati 1] pada malam hari. Mereka menaruh bendera Fretilin dan bendera Portugal di atas tanah dan menyuruh saya untuk tidur di atas bendera dan menginjak-injak bendera-bendera tersebut...aku berada dalam rumah tersebut selama dua hingga tiga jam.

Kemudian aku dipindahkan lagi ke salah satu rumah di Farol. Dalam rumah tersebut mereka menahan saya di dapur dan mendudukkan aku untuk diinterogasi. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Karena saya tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka harus mendapatkan seorang penerjemah untuk saya.

Pada malam itu mereka memindahkan lagi saya ke sebuah rumah di Farol [RT Pan]. Mereka menahan saya di kamar mandi...Lagi mereka memindahkan saya ke pelabuhan Dili sekitar jam 4 pagi. Di sana aku bertemu dengan VM dan WM. Kami bertiga ditahan bersama. Para anggota ABRI mencaci maki dan mengatakan kata-kata kotor pada kami.

Sepanjang hari saya disiksa. Walaupun saat itu saya sedang hamil, saya masih selalu disiksa sepanjang hari. Mereka menyuruh saya telanjang, tubuh saya dipegang, tubuh saya dibakar. Kemudian dalam keadaan telanjang tersebut, para ABRI memaksa kami bertiga berdiri saling berhadapan dan kami bertiga hanya menangis. Selain itu mereka memegang perut saya sambil mengatakan itu anak komunis. Dan dengan menggunakan penggaris, mereka memukuli kemaluan VM dan WM. Saya dipindahkan lagi ke Tropical untuk diinterogasi selama beberapa jam.³⁴⁸

335. Maria Olandina Isabel Caeiro Alves dibawa ke Kupang (NTT, Indonesia) pada 19 Desember 1975 dan ditahan sampai tanggal 3 Maret 1979 di sebuah rumah milik militer, di bawah pengawasan Kolonel Indonesia T225. Walaupun dia tidak dimasukkan ke sel, dia tidak diperbolehkan meninggalkan lingkungan sekitar rumah tersebut.

336. Martino da Costa Jesus juga ditahan di berbagai pusat penahanan yang berbeda sebelum akhirnya ditahan di Comarca. Dia memutuskan bertahan di rumahnya di Aitarak Laran (Kampung Alor, Dili) selama invasi, ketimbang melarikan diri bersama tetangganya. Seminggu setelah invasi, seorang tentara ABRI menangkap Martinho da Costa Jesus dan ketiga temannya, yaitu Sico Brito, Sung Hai, dan Francisco dos Santos, yang semuanya penduduk sipil, dan membawa mereka ke sebuah pos militer di Marconi (Kampung Alor, Dili). Martino da Costa Jesus bertutur kepada Komisi:

Setibanya di sana ibujari kami diikat dan kami disuruh berdiri merapat ke tembok. Mereka menakuti kami dengan tembakan peringatan [di udara]. Mereka membawa kami ke Farol, di sana kami dikurung secara terpisah. Saat itu saya ditendang oleh seorang komandan [identitas tidak diketahui] sambil mengatakan bahwa saya seorang komunis. Pada tanggal 16 Desember 1975 kami dibawa ke pelabuhan Dili, sampai di sana kami ditelanjangi dan disuruh tidur terlentang di tanah. Kemudian beberapa sepeda motor dikendarai di atas kami beberapa kali. Saya masih dapat merasakan rasa sakit itu. Saat di pelabuhan saya melihat T226, seorang anggota senior Apodeti. Kami ditahan di pelabuhan selama satu hari satu malam, kemudian kami dibawa lagi ke Tropical. Keesokan harinya tanggal 17 Desember 1975 saya dipukul oleh seorang kolonel ABRI bernama T227. Ia memukuli dahiku dengan sebatang kayu yang menyebabkan perdarahan. Kami ditahan di Tropical selama empat bulan, setelah itu kami dibawa ke penjara Balide, saya ditahan selama tiga tahun dan baru dibebaskan pada bulan Agustus 1978.³⁴⁹

Para korban yang dijadikan sasaran penahanan

337. Penelitian Komisi menunjukkan bahwa pada tahun-tahun awal, militer mempunyai strategi yang jelas untuk mengidentifikasi dan menangkap anggota-anggota partai Fretilin dan anggota Resistansi bersenjata, yakni Falintil. Militer juga menahan siapapun yang dianggap dapat memberi informasi mengenai Resistansi. Ini termasuk:

- Orang yang dicurigai sebagai anggota atau pendukung Fretilin atau organisasi-organisasi terkait
- Keluarga anggota Fretilin
- Individu yang ada kaitannya dengan bekas pemerintah Portugis
- Anggota UDT yang pernah ditahan Fretilin dan yang dicurigai karena hubungan tersebut

338. Bahkan anak-anak kecil pun diinterogasi. Maria José Conceição Franco Pereira menggambarkan pada sebuah Audiensi Publik CAVR bahwa ketika dia berusia empat tahun, dia ditangkap bersama ibunya oleh dua anggota ABRI. Mereka ditahan antara 1976 dan 1979. Di bawah ini dia menceritakan perlakuan mereka di Sang Tai Hoo:

Ibu saya ditangkap bersama beberapa perempuan lain dan anak-anak mereka di Becora [Dili] karena kakak laki tertua saya anggota Fretilin dan seluruh keluarga saya telah melarikan diri ke hutan kecuali ibu saya, yang seorang perawat. Ibu dan saya dibawa ke Sang Tai Hoo... Malamnya ibu diinterogasi. Dia ditampar, dicambuk, diludahi, disetrum, disundut dengan rokok, dan diancam dengan pistol. Saya hanya bisa melihat...

Hari berikutnya, ABRI menangkap seorang laki-laki yang sangat tua dan anaknya yang mungkin dua atau tiga tahun lebih tua dari saya saat itu. ABRI mulai menginterogasi mereka, tetapi laki-laki tua itu hanya diam. Kemudian anaknya menjawab karena dia mengetahui Fretilin yang menggunakan senjata di Marabia [Lahane, Dili]...Setelah itu ABRI bilang bahwa anak-anak tidak bohong dan mereka mulai menyiksa saya. Setiap kali mereka menyiksa saya ibu saya berteriak dan meminta mereka untuk menyiksa dia saja...Suatu saat seorang tentara mengangkat saya dengan memegang telinga saya, dan menggantungkan saya di luar jendela [tingkat pertama] di atas jalan di bawah.³⁵⁰

339. Dalam beberapa kasus alasan penangkapan tidak jelas, bahkan bagi korban. Daniel da Costa Oliveira memberitahu kepada Komisi bahwa dia ditangkap pada 26 Februari 1976 oleh seorang penerjemah Indonesia bernama T228 dan dua anggota Koramil. Tanpa diberitahu alasannya, dia ditangkap di rumahnya. Tentara membawa dia ke pantai di Kampung Alor, lalu ke pelabuhan, kemudian ke gedung Sota, dan akhirnya ke Tropical di mana dia diinterogasi dan dipukuli.³⁵¹

Kesetiaan kepada Indonesia

Banyak mantan tahanan yang menceritakan bahwa mereka harus melakukan aksi-aksi simbolis untuk memperlihatkan kesetiaan kepada Indonesia—pelaku invasi yang tidak lama kemudian menjadi penguasa di wilayah tersebut—dan penolakan terhadap Portugal dan Fretilin. Kesaksian-kesaksian mengenai hal ini diberikan kepada Komisi, meliputi seluruh periode pendudukan.

Salah satu cara umum untuk memaksakan kesetiaan itu melalui upacara-upacara berkaitan dengan bendera merah putih Indonesia. Maria de Fatima menceritakan, dia harus minum air bekas rendaman bendera Indonesia.³⁵² Orang lain diikat ke tiang bendera di depan kantor-kantor pemerintah atau instalasi militer.³⁵³ Filomeno Soares yang datang terlambat untuk bekerja sebagai anggota Ratih (Rakyat Terlatih) di Liquidoe, Aileu, dipaksa berdiri memberi hormat di hadapan bendera selama satu jam dengan satu kaki.³⁵⁴

Memiliki bendera Fretilin mengundang hukuman berat.³⁵⁵ António Alves ditangkap karena memiliki bendera Fretilin di rumahnya di Luculai (Liquiçá, Liquiçá) pada 20 November 1990 dan dia ditempeleng, ditendang, dan dipukuli habis-habisan di Koramil Liquiçá sampai pingsan.³⁵⁶ Valenti Martins dipukuli dengan pentungan kayu yang dibungkus bendera Fretilin pada 1991 karena menjadi anggota Fretilin, di Manetu (Maubisse, Ainaro).³⁵⁷ Tahanan lainnya dipaksa menghina bendera Portugis atau Timor-Leste.

Maria Olandina Isabel Caiero Alves dipaksa duduk di atas bendera Portugis dan menginjak bendera Fretilin selama beberapa jam pada Desember 1975.³⁵⁸ Dalam sebuah kasus lain, Almeida Seguera menuturkan kepada Komisi tentang kakak laki-laknya Dasbere, seorang anggota Fretilin, yang ditangkap pada Mei 1976 oleh ABRI Batalion 403 di Distrik Ermera. Menurut dua orang TBO, dia difoto dengan sebuah bendera Portugis sebelum kemudian dibawa pergi dan dibunuh.³⁵⁹

Sebagaimana benderanya, lagu kebangsaan Fretilin yaitu *Foho Ramelau* (Gunung Ramelau) digunakan selama interogasi; para tahanan melaporkan mereka dipaksa menyanyikan lagu kebangsaan tersebut di hadapan para penangkap mereka.³⁶⁰ Tahanan lain melaporkan, mereka dipaksa membaca teks Pancasila. Francisco da Conceição mengatakan kepada Komisi, jika dia menolak membacanya, dia akan dimasukkan ke dalam tangki air selama 30 menit, di Maubisse (Ainaro) pada 1991.³⁶¹

Interogasi, penyiksaan, dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi lainnya

340. Interogasi, yang sering menggunakan penyiksaan, dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan Resistansi. Contoh berikut ini menggambarkan hal tersebut. Julio Alfaro, seorang Timor-Leste mantan serdadu (*Furiel*, Sersan Dua) dalam militer Portugis, diinterogasi mengenai Fretilin setelah polisi militer dan intel menangkap dia pada 12 Desember 1975. Dia mengatakan kepada Komisi bahwa setelah dia disekap selama dua bulan di sebuah gedung di belakang Tropical, dia dipindahkan ke sel isolasi di Comarca dan sejak saat itu dia hanya dibawa keluar untuk diinterogasi. Dia mengatakan bahwa dia tidak hanya ditanya mengenai hubungannya dengan Fretilin dan apakah dia seorang komandan militer, tetapi juga tentang kekuatan militer Fretilin:

Tujuan lain yang mereka ingin dapatkan yaitu tentang sejauh mana kekuatan militer Timor-Leste, baik kekuatan persenjataan, personalia, maupun kekuatan dalam logistik. Mereka juga bertanya kepada saya, sampai kapan Fretilin bisa bertahan di hutan; dan saya menjawab bahwa minimal Fretilin bisa bertahan sampai sepuluh tahun. Dalam interogasi saya tidak disiksa, tetapi mereka memasukkan saya kembali ke dalam sel khusus, 'Sel Maubutar'. Sesudah saya diinterogasi, saya tidak diberi apapun dan hanya tidur di atas lantai bersemen.³⁶²

341. Penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya digunakan terhadap anggota-anggota Fretilin sejak awal pendudukan, walaupun, seperti dikatakan Julio Alfaro, tidak mesti selalu digunakan. Bentuk-bentuk penyiksaan dari awal periode ini, yang tercatat

dalam kesaksian para korban, terjadi berulang-ulang selama masa pendudukan. Metode-metode ini mencakup:

- memukul dengan menggunakan tangan, senjata, batangan kayu, potongan besi, atau benda berat lainnya
- menendang, sering dengan menggunakan sepatu bot militer
- setrum
- menyelomoti badan korban dengan rokok
- meletakkan ibujari kaki korban di bawah kaki kursi atau meja yang diduduki oleh satu orang atau lebih, untuk menindih ibujari tersebut
- mengancam korban dengan pisau atau senjata api
- menggunakan air dengan berbagai cara, seperti menyiramkan air panas atau air yang sangat dingin ke tubuh korban, atau berulang-ulang memasukkan korban dalam tangki air selama jangka waktu tertentu

342. Para tahanan juga disekap dalam kondisi yang tidak manusiawi. Banyak yang melaporkan, pakaian mereka dilucuti, dan mereka ditahan dalam keadaan telanjang selama berminggu-minggu. Tahanan lain melaporkan bahwa mereka tidak diberi makan dan minum.

Interogasi di Dili

FN seorang anggota kelompok pelajar Fretilin Unetim (*União de Nacional Estudantes de Timor*), yang berkegiatan di Baucau dan Aileu dan kemudian menjadi anggota kelompok perempuan Fretilin OPMT (*Organização Popular de Mulheres Timor*) di Dili. Pada Januari 1976, ketika dia berusia sekitar 16 tahun, temannya, Filomena Aniceto, datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa militer memanggil mereka berdua ke Sang Tai Hoo untuk interogasi. FN mengatakan kepada Komisi:

Filomena dan saya duduk bersama, mendengarkan pertanyaan yang diajukan penerjemah, T229, seorang perempuan Timor-Leste. Tentara menanyai kami berdua, “Apakah Anda mahasiswa Unetim? Sekarang ceritakanlah kegiatan atau misi Unetim selama ini, karena kami mendengar kalian berada di Aileu [Aissirimou] [di situ ada basis Fretilin pada masa konflik internal]. Di sana kalian hidup sebagai binatang—benar atau tidak?” Kami berdua menjawab bahwa itu tidak benar. Tetapi mereka tetap menginterogasi kami dan memutar balik kata-kata kami...hingga malam.

Sesudah [interogasi] mereka memaksa teman saya Filomena Aniceto tetap tinggal di Sang Tai Hoo, namun saya disuruh pulang ke rumah. Di kemudian hari saya dipanggil kembali untuk diinterogasi...

Mereka menyampaikan kepada saya bahwa teman-teman saya [para mahasiswa Unetim di Aileu] yang diinterogasi sebelum saya, telah menyatakan bahwa kami melakukan hal yang sama di Aileu dan kehidupan kami seperti binatang. Mereka mendekati saya dan mulai meraba-raba dari kepala sampai kaki. Badan saya terasa dingin seperti mayat, tetapi dalam hati saya selalu pinta Bunda Maria agar melindungi saya dari segala apa yang mereka lakukan. Waktu itu saya teriak dan menangis, tetapi mereka marah-marah dan mereka bilang saya anjing betina. Mereka menarik rambutku dan mengatakan, “Sekarang coba engkau membujuk para pemimpin Unetim dan Fretilin supaya mereka datang untuk menyelamatkan kamu.” Mereka memeriksa saya, memutar balik kata-kata saya, hingga petang hari.

Pada hari kelima interogasi, militer datang ke rumah saya pada suatu hari Senin dengan truk yang besar. Semua orang tahu truk militer itu diparkir di depan rumah saya. Saya tidak merasa kaget...tetapi orangtua saya merasa marah karena berulang kali orang datang membawa saya untuk diinterogasi. Jadi pada kali kelima, ibu saya juga mendampingi saya...Mereka membawa saya ke Hotel Tropical... Di sana mereka melarang mama saya untuk ikut masuk...Pada saat saya naik ke tangga untuk lantai atas, pasukan mengeroyok mendorong saya dengan senjata di belakang saya. Mereka berteriak supaya saya cepat-cepat ke sana. Pada waktu itu saya melihat ada banyak tahanan yang berada di gedung tersebut. Interogasi saya dijalankan oleh seorang tentara Indonesia bernama T230 dan seorang penerjemah Indonesia bernama T231. Ia bertanya kepada saya, “Kapan pasukan dari luar negeri datang ke Timor-Timur untuk melawan kami pasukan Indonesia?” Dengan kata-kata seperti itu dan tuduhan-tuduhan, mereka mencoba mulai berdalih dengan orang yang diinterogasi. Mereka menuduh bahwa saya dipaksa orang menjadi anggota Unetim dan Fretilin. Lalu mereka mencuci bendera merah putih dan menyuruh saya minum air cucian itu. Kemudian mereka dengan kain hitam menutupi muka saya, dan memasang helm di kepala saya, lalu memukul saya dengan kayu pendek yang biasanya dipakai oleh polisi [castete]. Mereka memukul saya sampai pingsan... Mereka lepaskan kembali helm dan kain hitam tersebut, kemudian mereka memukul saya dengan ujung castete. Itu kena di kepala saya sampai memar dan berdarah .

Setelah interogasi mereka selesai, FN dan Filomena disuruh bekerja di rumah komandan setiap hari, untuk mengurus bunga-bunga. Menurut penuturan FN, tiap pagi mereka dijemput dengan truk militer, sampai mereka dilupakan begitu saja. FN mengutarakan dampak dari hubungannya dengan militer terhadap hidupnya:

Lalu di antara masyarakat muncul isu-isu terhadap kami bertiga. Kami bertiga sering dicurigai oleh teman-teman lain bahwa kami sudah melakukan hubungan seksual dengan bapak-bapak ABRI, sehingga mereka melontarkan kata-kata kepada kami bertiga bahwa kehidupan kami sudah busuk seperti kentang yang busuk [fehuk ropa dodok]. Isu tersebut muncul karena kami bertiga selalu dipindah-pindah ke tempat yang berbeda-beda untuk diinterogasi. Semuanya isu itu gara-gara kami bertiga pernah disuruh ke tempat RT Pang [rumah tangga Panglima Brigjen Dading Kalbuadi] di Farol untuk menanam bunga di pot-pot yang ada. Setiap hari kami bertiga dijemput oleh sebuah mobil militer ke tempat rumahtangga Pang untuk merawat bunga-bunga tersebut.³⁶³

Pengambilalihan daerah-daerah lain

343. Menyusul dikuasainya Kota Dili pada 7 Desember dan Baucau dua hari kemudian, pasukan Indonesia bergerak melalui wilayah tengah, barat, dan timur hampir bersamaan. Indonesia sudah menguasai sebagian besar kota-kota dan jalur utama pada Juni 1976 (lihat Bagian 3: Sejarah konflik, bagian mengenai Operasi Seroja, 1976-1979).

344. Seperti yang terjadi saat invasi di Dili, para pejuang ditahan setelah tertangkap atau menyerahkan diri kepada pasukan invasi. Salvador Martins menuturkan kepada Komisi:

Pada tahun 1975 saya ditangkap bersama dua orang teman [José Guterres dan Francisco, keduanya anggota Fretilin/Falintil] oleh ABRI di Fatubessi [Hatolia, Ermera]. Kami dihukum dengan disuruh menggali lubang di tanah, memotong dan membawa kayu untuk membangun pos ABRI. Saat ditangkap, kami bertiga membawa senjata seperti G-3, metralhadora [senapan mesin], dan Mauser. ABRI merampas senjata ini dan menyerahkannya ke markas militer di Ermera. Kami ditahan di Fatubessi selama satu bulan, kemudian dibawa ke markas militer di Ermera selama satu bulan...Setelah itu kami boleh pulang ke keluarga kami.³⁶⁴

345. Seperti halnya di Dili, sebagian besar masyarakat lari setelah mereka mendengar bahwa pasukan Indonesia mendekat. Di beberapa tempat di mana masyarakat tidak sempat melarikan diri pada waktunya, Komisi mendapat laporan tentang terjadinya penangkapan besar-besaran. João Freitas da Silva menggambarkan apa yang dia saksikan ketika ABRI memasuki daerah Kaibuti-Maimi (Ossorua, Ossu, Viqueque):

Pada bulan Januari 1976, ketika ABRI menyerang dan memasuki kota Ossu, saya tinggal di Kaibuti-Maimi Ossurua. Karena takut, saya dan keluarga melarikan diri ke Ahabu di Desa Uabubo [Ossu,

Viqueque]. Pada suatu hari bulan Februari, ABRI menyerang kami termasuk masyarakat yang lain sehingga saya dan seorang teman bernama Gilberto lari ke semak-semak hutan, untuk bersembunyi dan menyaksikan kejadian tersebut.

Waktu itu, banyak orang tertangkap, termasuk Francisco da Silva yang dibawa pergi bersama tentara untuk mengangkut barang-barang mereka...Selain itu ABRI juga membakari rumah-rumah penduduk dan mengambil hewan-hewan piaraan mereka.³⁶⁵

346. Contohnya, José Freitas mengatakan kepada Komisi bahwa dia dan 166 orang lainnya ditahan di Maubisse (Hato Builico, Ainaro) oleh Batalion 405 selama dua hari setelah militer memasuki kota itu pada Desember 1975.³⁶⁶ Hampir sama, seorang lelaki Timor-Leste menceritakan kepada Komisi bagaimana ia sebagai pejabat keamanan desa telah memberi makan kepada Falintil ketika ABRI menyerang Liquidoe [Aileu]. Sekitar 190 orang termasuk keluarganya ditangkap dan dibawa ke sebuah rumah pribadi di kota Aileu; di sana mereka disiksa oleh orang-orang Timor-Leste yang tidak dikenal.³⁶⁷

347. Penduduk sipil juga ditahan. Kasus-kasus yang dilaporkan ke Komisi menunjukkan bahwa banyak orang ditahan secara acak karena militer berusaha memisahkan anggota Fretilin dari masyarakat umum. Pola-pola penahanan sewenang-wenang dan penggunaan penyiksaan serta perlakuan kejam terhadap tahanan mirip dengan yang terjadi di Dili. Para tahanan disekap di berbagai gedung yang diduduki oleh militer³ dan diinterogasi serta disiksa berkali-kali. Dua contoh penahanan individual adalah:

348. Seorang laki-laki Timor-Leste ditangkap bersama keluarganya ketika militer, termasuk Partisan, memasuki desanya di Viqueque pada 1976. Mereka ditempatkan di sebuah sel di kota itu dan diinterogasi. Dia mengatakan kepada Komisi bahwa dia tidak dipukuli, tetapi orang-orang lain dalam sel itu dipukuli habis-habisan.³⁶⁸

349. GN menceritakan bagaimana militer menyerbu markas OPMT di Aileu (basis Fretilin selama konflik internal bersenjata) ketika militer menyerang kota itu pada 1975 dan menangkapi perempuan yang bekerja di sana. Pada saat penangkapan, perempuan-perempuan itu ditendang dan dipukuli dengan senjata dan kemudian ditahan di *Caserna* (barak militer Portugis) Aileu selama tiga bulan. Dia dan perempuan lainnya diperkosa di bawah ancaman akan dibunuh.³⁶⁹

.....
* Domingos dos Reis mengatakan kepada Komisi bahwa dia dan keluarganya ditahan di sebuah gedung di jalan utama di desa mereka, Caicasa Hoo (Bucoli, Baucau) selama empat hari, setelah penangkapannya oleh pasukan payung Indonesia ketika mereka mendarat di desanya pada 10 Desember 1975. Abrão da Costa Freitas melaporkan, setelah marinir menyerang Kota Baucau, dia ditangkap pada 18 Desember 1975 dan ditempatkan di pos marinir di Uma Lima (Kota Baucau, Baucau) selama delapan jam, di sana dia diinterogasi, dipukuli, dan ditendang.

Perpecahan komunitas

350. Anggota UDT dan Apodeti berperan dalam mengidentifikasi anggota Fretilin untuk kepentingan militer Indonesia. Di distrik Ainaro, misalnya, José da Costa mengatakan kepada Komisi bahwa anggota ABRI dan empat anggota UDT menangkap pamannya Mau-Kei pada 1976 serta Abak, Manuel Araújo, Bento, dan José Mau-Kiak, di Akadiroto, Desa Suro-Kraik (Ainaro, Ainaro), karena mereka semua diidentifikasi sebagai anggota Fretilin.³⁷⁰ Albino do Carmo Pereira melaporkan, pada Juli 1976 dia, Alfredo Bianco, dan Domingos Maumera dipaksa T232, *liurai* di Cassa (Ainaro) sekaligus komandan Apodeti, bersama anak laki-lakinya T233, untuk menjadi pembantu di dapur Batalion 327 di pos mereka di Mau Mali Lau, Soru Lau (Ainaro, Ainaro). Untuk menyelamatkan diri, mereka melakukan pekerjaan ini selama enam bulan.³⁷¹

351. Bemvinda Belo menuturkan kepada Komisi:

Pada bulan Januari 1976 setelah kami menyerah, suami saya Cipriano Magno Ximenes ditangkap oleh tiga [orang] Apodeti atas perintah T234. Setelah ditangkap dia diserahkan kepada Marinir Indonesia dan ditahan beberapa hari. Setelah dua hari, saya dan anak saya Ana bergabung di tempat penahanan, bersama seorang etnis Cina. Dalam tahanan, korban dipukul dengan kayu oleh T235 dan T236 [istri-istri pemimpin partai UDT]. Lima hari kemudian, [suami saya] Cipriano disiksa sampai mati.³⁷²

352. Luis Pereira dari Laclubar (Manatuto) menjelaskan, pada 1976 dia adalah anggota UDT. Dia meninggalkan Laclubar untuk bertemu dengan pasukan Indonesia yang sedang memasuki Manatuto dari Baucau dan menyerahkan diri kepada mereka pada September 1976. Dia bertanya kepada ABRI, apakah mereka akan pergi ke Laclubar untuk melindungi anggota UDT dari Fretilin; karena dia yakin Fretilin akan datang dari basis mereka di Aileu untuk membunuh para pendukung UDT dan Apodeti. Luis Pereira mengatakan, ketika militer memasuki Laclubar mereka hanya menangkap orang-orang yang bersenjata dan mereka bersikap baik terhadap masyarakat.³⁷³ Namun, tidak lama kemudian mereka mulai menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran.

Penahanan di luar Dili

353. Beberapa orang yang ditahan di daerah-daerah lain dikirim ke Dili untuk interogasi lebih lanjut, karena pada saat itu sebagian besar aparat intel berbasis di ibukota.³⁷⁴ Marcus Ais, misalnya, dibawa dari Oecussi ke Comarca di Dili. Pasukan Kopassandha* menangkap Marcus dan pendukung-pendukung Fretilin

* Kopassandha (singkatan untuk Komando Pasukan Sandi Yudha) adalah Pasukan Khusus Indonesia. Mereka memiliki satuan intelijen dan satuan tempur. Mereka juga disebut 'Baret Merah' karena baret berwarna merah yang mereka kenakan.

lainnya, termasuk pemimpin Fretilin Alfredo Ramos, ketika mereka memasuki Oecussi. Para tawanan pertama-tama ditahan di Companhia Oecussi (belakangan menjadi Kodim Oecussi) sebelum mereka dipindah ke Dili. Marcus melaporkan, dia disiksa di kedua tempat itu, di Oecussi oleh Baret Merah dan di Balide oleh empat orang Partisan.³⁷⁵

354. Orang-orang lainnya ditahan di sejumlah pusat penahanan informal, yang didirikan saat militer memasuki suatu daerah atau di komando-komando militer. Kisah dalam boks berikut ini memaparkan sebuah studi kasus mengenai pusat-pusat penahanan yang didirikan di Subdistrik Baucau Kota (Baucau), pusat untuk wilayah timur.

Studi kasus: pusat-pusat penahanan di Kota Baucau³⁷⁶

Sejak saat pertama militer Indonesia memasuki Baucau pada 9 Desember 1975, mereka menyita berbagai macam gedung yang kemudian menjadi terkenal sebagai pusat-pusat penahanan dan penyiksaan yang kejam. Para tahanan sering dipindah dari satu pusat penahanan ke pusat penahanan lainnya. Misalnya, jika orang yang menginterogasi di satu pusat penahanan frustrasi dengan jawaban dari para tahanan, mereka mengirim tahanan ke pusat penahanan yang lain. Berdasarkan wawancara-wawancara yang dilakukan Komisi, diketahui bahwa periode interogasi dan penyiksaan yang paling kejam ialah dari 1975 sampai dengan 1980 di Baucau. Pusat-pusat penahanan dan penyiksaan yang digunakan pada periode ini dan kadang pada tahun-tahun berikutnya adalah:

Hotel Flamboyan

Hotel yang terletak di Bahu, Baucau Kota Lama, ini merupakan kompleks yang terdiri atas tiga gedung. Didirikan di atas tanah keramat pada zaman pendudukan Portugis, yang dibeli pada 1959 dari pemilik tanah bernama Venancio Boavida, oleh seorang usahawan Portugis, José Ricardo, dengan harga sekitar USD100.000. Pada 1960, José Ricardo mendirikan pabrik sabun dan Hotel Baucau di tanah itu. Kepemilikan hotel itu berpindah tangan beberapa kali sebelum pendudukan Indonesia. Pada saat ABRI menginvasi Baucau, tanah dan bangunan itu disita dan kemudian mereka menggunakan hotel tersebut sebagai barak tentara, lalu mengganti namanya menjadi Hotel Flamboyan mengikuti nama gerak militer 'Flamboyan' yang baru saja mereka lakukan. ABRI mengubah pabrik sabun itu menjadi gudang amunisi dan penjara yang menampung kurang-lebih 80 tahanan, termasuk perempuan hamil dan anak-

anak, dari 1975 sampai 1979. Banyak tahanan yang menghilang dari Flamboyan, terutama pada 1975-1976. ABRI menggunakan kolam renang dekat pabrik untuk merendam para tahanan; berbagai macam penyiksaan yang menggunakan air mereka lakukan. Penjara dipindah ke Rumah Merah pada 1989, tetapi ABRI tetap menggunakan hotel itu sampai 1999 sebagai barak, untuk mengakomodasi keluarga dan tamu mereka yang mengunjungi Baucau, dan sebagai tempat untuk acara-acara resmi.³⁷⁷

Kodim 1628/Koramil 1628-01

ABRI mengambilalih markas-markas militer Portugis setelah invasi untuk markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1628 dan Komando Rayon Militer (Koramil) 1628-01, dan menggunakan gedung-gedung itu sampai Indonesia meninggalkan Timor-Leste. Selama pendudukan, kedua struktur komando itu mempunyai ruang interogasi dan penyiksaan yang terpisah dan menggunakan bangunan-bangunan tersendiri sebagai tempat penahanan.

Uma Lima (bahasa Tetum yang berarti ‘Lima Rumah’)

Pada 1976 ABRI memperluas tempat-tempat penahanan hingga mencakup Uma Lima. ABRI memakai lima rumah ini sebagai asrama tentara dan sebagai tempat penahanan, interogasi, dan penyiksaan (termasuk pemerkosaan) para tahanan. Pada 1989, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Indonesia untuk sementara menempati rumah tengah. ABRI tetap menggunakan keempat rumah lainnya sebagai asrama dan ruang interogasi sampai ABRI meninggalkan Uma Lima pada 1999.

Rumah Merah

Rumah Merah barangkali diberi nama menurut baret merah yang digunakan oleh anggota Kopassandha, yang mendirikan rumah tersebut di tanah kosong pada 1977, tanpa meminta izin atau memberi kompensasi kepada pemiliknya, yaitu Joaquim Belo. Dari 1979 sampai 1999, Batalion 330 Bukit Barisan dari Sumatra, menempati Rumah Merah sebagai asrama dan pusat penahanan. Dari semua pusat penahanan, Rumah Merah merupakan tempat penahanan yang paling ditakuti, karena dikenal sebagai tempat pemerkosaan, penyiksaan, dan penghilangan, yang menduduki peringkat kedua di bawah barak-barak RTP (lihat di bawah). Dikirim ke Rumah Merah berarti jatuh di tangan Kopassandha/Kopassus yang terkenal kejam.

Clubo Municipal (bahasa Portugis yang berarti ‘Klub Kota’)

Pemerintah jajahan Portugis mendirikan Clubo Municipal sebagai tempat olah raga dan tempat untuk mengadakan acara-acara besar, seperti perayaan Malam Tahun Baru. Tentara Indonesia menggunakan

Clubo Municipal sebagai pusat penahanan orang Timor-Leste yang menyerah. ABRI yang menduduki tempat ini sejak mereka memasuki Baucau sampai dasawarsa 1980-an, tidak hanya menempatkan anggota-anggota Kopassandha/Kopassus, tetapi juga Kodim dan Koramil serta Hansip.

RTP-12, -15 dan -18 (Resimen Tim Pertempuran)

RTP-12, -15, dan -18 adalah barak-barak tentara Portugis yang diambilalih oleh ABRI ketika mereka memasuki Baucau. RTP-12 terletak di Buruma, RTP-15 di Teulale, dan RTP-18 di Baucau Kota Baru. ABRI menggunakan gedung-gedung itu sebagai barak dan juga tempat penahanan, interogasi, dan penyiksaan. Ketiga pusat penahanan ini mempunyai reputasi sebagai tempat interogasi dan pusat penahanan yang paling mengerikan di Baucau sampai Indonesia pergi pada 1999, tak peduli dengan adanya pergantian personel-personel mereka di sana. Tempat-tempat ini menjadi ditakuti karena kekejaman yang diderita para tahanan yang di sana, terutama pada 1975-1979. Para tahanan yakin, sekali mereka dikirim ke salah satu RTP berarti mereka tiba pada tahap interogasi terakhir dan akan segera mati. Batalion Infanteri 745 (Lospalos, Lautém) dan Artileri Medan (Armed) 13 ditugaskan di RTP-12. RTP-15 dan RTP-18 dijaga hanya oleh anggota-anggota Artileri Medan 13. Armed 13 berasal dari Sukabumi, Jawa Barat, dan bertugas di daerah Quelicai (Baucau) di bawah komando RTP-18. Salah satu perwira Indonesia Armed 13, yaitu Letnan Satu T237, adalah interogator yang ditakuti. Pada 1979 dia mengirim 16 tahanan dari RTP-18 ke Goa Lacudala di Quelicai (Baucau), di mana mereka bergabung dengan tahanan dari Lautém dan Viqueque, sebelum dia memberi perintah untuk membantai mereka.

355. Seperti disebut di atas, sebagian besar penduduk lari ke hutan ketika militer mulai mendekat, untuk menghindari penangkapan. Hari-hari dan minggu-minggu setelah invasi militer Indonesia, orang mulai kembali ke rumah untuk mencari makanan dan jika mereka tertangkap, mereka ditahan. Misalnya, Sahe-Dara melaporkan kepada Komisi:

Pada tahun 1976, pasukan Indonesia memasuki Uatolari [Viqueque]. Pasukan Falintil membawa saya dan beberapa teman seperti Veronica, Maria Lopes, Ereleto, Palmira, Pedro, Acaçio, Ventura, dan Bobu ke hutan dekat Mau Boru-Babulu [Uatolari, Viqueque] dan kita tinggal di sana selama tiga minggu... Kemudian kami kehabisan makanan, jadi kami pergi mencari makan di sekitar Boru-Lalu. Dua orang Falintil, kakak laki-laki saya Manuel, dan temannya Luis, menjaga kami dan menginap di sana. Tiba-tiba pasukan Indonesia

*beserta tiga orang Hansip: [Komandan] T238 dan [anakbuahnya] T239 dan T240, datang menyerang pada pukul 12 malam dan langsung mengikat Komandan Falintil Manuel dan Luis dan [kami semua] dibawa ke Uatolari.*³⁷⁸

356. Sahe-Dara menjelaskan bahwa Manuel dan Luis dibawa pergi oleh anggota Hansip dan tidak pernah kembali. Anggota kelompok lainnya ditahan di Uatolari (Viqueque) selama seminggu. Suatu hari Komandan Hansip, Hermenegildo, menyuruh Sahe-Dara membawa sepucuk surat untuk Xanana Gusmão di hutan, tetapi dia kembali sebelum menyampaikan surat itu dan kemudian ditahan di Uatolari selama sembilan bulan. Teman-teman yang ditahan bersama dia dibawa ke Beaçõ; di sana empat orang meninggal dan yang lain ditahan selama sembilan bulan.

Pengamanan wilayah: 1976-1979

357. Pada Juli 1976 Timor-Leste secara resmi, menurut Indonesia, dijadikan wilayah Indonesia. Hal ini mengubah struktur keamanan serta pola-pola penahanan dan interogasi. Perubahan ini termasuk:

- Penugasan polisi militer di Dili dan kota-kota besar; mereka mulai berperan dalam membangun pusat-pusat penahanan*
- Pembangunan komando-komando teritorial militer di tingkat distrik (Komando Distrik Militer, dalam laporan ini disebut Kodim) dan subdistrik (Komando Rayon Militer, dalam laporan ini disebut Koramil)†
- Pembangunan kantor polisi tingkat provinsi, distrik, dan subdistrik

358. Sejak itu, tahanan dari daerah tidak dipindah ke Dili sesering sebelumnya; alih-alih, mereka ditahan di Kodim dan Koramil setempat. Satuan-satuan teritorial memusatkan perhatian mereka untuk menangkap para pejuang Resistansi dan mengidentifikasi anggota jaringan klandestin di wilayah kewenangan mereka.

359. Gerakan klandestin berkembang tidak lama setelah Fretilin masuk hutan menyusul invasi Indonesia pada 7 Desember 1975. Terorganisasi dalam kelompok-kelompok kecil, para pendukung Resistansi membantu gerilyawan di gunung dengan memberi makanan, obat-obatan, pakaian, dan informasi mengenai situasi di Dili. Kelompok-kelompok kecil ini berkembang secara spontan tanpa strategi bersama, bekerja secara independen, dan melakukan kontak sendiri-sendiri dengan komandan-komandan Falintil di gunung.³⁷⁹ Jaringan-jaringan ini bertambah kuat setelah jatuhnya 'daerah bebas' (*zonas libertadas*) pada 1978-1979.

360. Operasi-operasi tempur terus berlanjut sementara militer bergerak maju ke dalam daerah-daerah Fretilin. Para pejuang dan penduduk sipil yang tertangkap dalam

* Contoh, polisi militer bertugas di Penjara Comarca di Balide (Dili).

† Komando-komando militer ini ada di bawah perintah Komando Pertahanan Daerah Timor Timur (Korem, atau Komando Resort Militer) 164 Wira Dharma, yang bermarkas di Dili.

operasi-operasi ini sering ditahan dan diinterogasi. Jaringan- intelijen yang dibentuk di semua komunitas sampai di tingkat RT membantu militer Indonesia. Hal ini berakibat pada penangkapan anggota Resistansi bersenjata yang belum menyerahkan diri dan penduduk sipil yang tinggal di wilayah yang dikuasai Indonesia, tetapi mempunyai hubungan dengan pihak Resistansi dengan berbagai cara.

Perkembangan jaringan intelijen

361. Dari pertengahan 1976, setelah periode awal kekacauan dan pemindahan besar-besaran surut, penangkapan yang dilaporkan kepada Komisi tampaknya lebih terarah. Barangkali ini merupakan hasil dari jaringan informan intelijen yang rumit, yang dibentuk oleh militer Indonesia hingga ke tingkat komunitas lokal. Bagian intel Kodim dan Koramil mengumpulkan informasi dari anggota-anggota partai politik yang berseberangan dengan Fretilin, orang-orang Timor-Leste yang direkrut secara massal sebagai Hansip, militer, atau TBO, penduduk sipil yang menyerah dan ditahan serta diinterogasi mengenai saat-saat mereka di hutan dengan Fretilin dan jaringan-jaringan intelijen komunitas, di mana tetangga dapat melaporkan tetangga lainnya jika mereka dicurigai melakukan kegiatan klandestin; semua ini memberi masukan bagi proses pengumpulan informasi. Metode-metode ini menciptakan suasana penuh kecurigaan dan meningkatnya perpecahan di tingkat komunitas. Contohnya, Palmira da Costa de Ornai dari Dili menceritakan kepada Komisi:

Pada bulan Agustus 1976, menantu saya, Horacio Faria, ditangkap oleh ABRI atas laporan yang diberikan oleh tetangga saya, T241 dan T242, anggota Apodeti, bahwa Horacio Faria telah memberi bantuan kepada Falintil di hutan. Setelah ditangkap Horacio Faria dibawa ke Comarca Balide kemudian disiksa, seperti: disetrum dengan listrik, dipukul. Horacio ditahan beberapa bulan di Comarca Balide. Setelah dibebaskan, ia sakit dan akhirnya meninggal dunia; ini akibat dari siksaan yang dialaminya di Comarca Balide.³⁸⁰

362. Luis Vasconcelos Babo bersaksi bahwa pada 5 Mei 1976 anggota intel, seorang Timor-Leste, T243, dan seorang penduduk sipil Timor-Leste, T244, memberi informasi palsu kepada Batalion Infanteri (Yonif) 512 mengenai ayah Luis. Militer kemudian menangkap Luis dan keluarganya pada 6 Mei 1976 dan menahan mereka di pos Yonif 512 di Kota Ermera:

Saat itu ABRI menangkap sebagian besar keluarga saya yakni ayah, saya, dan beberapa orang saudara saya José Ricardo, José Ximenes, Mario Babo, Abel Babo, Rogério Babo, Rosalina Babo, dan Rosa Madeira. Kami semua ditahan dan diinvestigasi sehubungan dengan partai yang kami ikuti. Setelah investigasi kami, yang lain disuruh kembali ke rumah, sedangkan ayah saya, José Babo dan Rosalina Babo dibawa ke Kodim Ermera. Mereka berdua ditahan satu malam. [Pagi harinya] ibu saya disuruh kembali ke rumah,

sedangkan ayah saya, José Babo, tetap ditahan di Kodim Ermera. Saat ditahan pakaian ayah saya ditanggalkan, kecuali celana dalam. Ayah saya disiksa dalam keadaan demikian, hingga babak belur di dalam tahanan.³⁸¹

363. Satu hari setelah dilepas, seorang anggota Hansip T799 menangkap kembali Luis Vasconselos Babo dan membawanya ke Kodim Ermera untuk menghadap T245, orang Indonesia yang menjabat sebagai kepala intel dan komandan Kodim, T246. Dia mengatakan kepada Komisi bahwa dia dipukuli, diinjak, dan dicekik kemudian ditahan di Kodim selama tiga tahun. Ayahnya, José Babo, dibawa ke Titlala di Desa Poetete (Ermera) dan dibunuh oleh anggota intel T247, orang Timor-Leste, dan disaksikan para anggota Hansip T248, T249, T250, T251, T252, T253, T254, dan T255.³⁸²

Penahanan para pejuang Resistansi

364. Sasaran utama militer Indonesia jelas para pejuang Falintil.³⁸³ Tidak aneh jika sangat banyak lembaga-lembaga yang beraneka macam bekerjasama untuk menangkap orang-orang seperti Daniel da Silva, anggota Falintil di bawah komando Americo Ximenes (Sabica) dan Jacob Reis (Daya). Dia mengatakan kepada Komisi bahwa ia dan dua anggota Falintil lainnya, Alberto Naha Loi dan Rodolfo Riba Naha, ditangkap pada 1977 melalui kerjasama gabungan dari:

- ABRI Batalion Yonif 408
- Para personel Kodim 1630 Viqueque dan Komandan T255, orang Timor-Leste
- T256, komandan tentara Indonesia asal Timor-Leste dari Uatolari
- T257, seorang Hansip
- T258 dan T259, keduanya penduduk sipil

365. Para tahanan dibawa ke Kodim 1630 Viqueque dengan tangan terikat di belakang punggung, sementara Komandan T255, Komandan T256, dan T260 menyita ternak dan kuda milik Daniel da Silva. Daniel da Silva menuturkan kepada Komisi tentang bagaimana para tahanan diinterogasi:

Setelah satu malam di Kodim 1630 Viqueque, keesokan harinya sekitar pukul 8 pagi, kami bertiga mulai diinterogasi oleh para anggota ABRI, T261, T255, dan T256. Saat investigasi T256 berkata: "Kamu, sebagai pasukan Falintil menciptakan komunisme di daerah Timor-Timur." Karena emosi, saya menjawab bahwa kami sebagai Falintil, kami tidak memelihara komunis, sehingga T256 mulai menanggalkan pakaian saya; kemudian saya disetrum dengan listrik oleh T261. Setelah itu saya dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dan ditahan bersama seorang tahanan bernama Anibal, ia adalah mantan camat di Uatolari [pada zaman Portugis].³⁸⁴

366. Daniel da Silva dan Anibal ditahan selama lima hari, setelah itu Yonif 408 membawa pergi Anibal dengan helikopter ke sebuah tempat yang tidak diketahui. Daniel da Silva ditahan di markas Yonif 408 selama enam bulan.³⁸⁵

367. Raul, komandan Falintil di daerah Remexio (Aileu), mengatakan kepada Komisi bahwa pada 15 Januari 1979 dia ditangkap oleh lima prajurit dari Koramil atas perintah komandan Koramil Kapten T266. Di antara lima anggota Koramil itu ada satu orang Indonesia yaitu komandan Koramil, dan empat orang Timor yaitu T284, T262, T264, dan T265. Raul ditahan di gedung Timor Klaran di Kota Aileu. Ketika dia tiba di sana, seorang anggota Zipur (Zeni Tempur) Batalion 14 menganiaya dan menyiksanya dengan mengikat tangan dan kakinya, mengimpit dadanya dengan sebatang besi besar, kemudian memukuli dan menyetrumnya.

368. Raul menyatakan bahwa dia diinterogasi selama dua jam mengenai nama-nama komandan Fretilin/Falintil yang ada di hutan. Karena dia tidak menjawab, anggota Zipur itu memasukkan abu rokok yang sudah dicampur dengan kotoran burung dan bensin ke dalam mulutnya. Seorang anggota Zipur menelanjangi Raul kemudian memukul, menendang, dan meninjunya sampai salah satu giginya terlepas. Anggota Zipur itu lalu memasukkan Raul ke dalam tangki penuh air. Tidak lama kemudian, seorang anggota Zipur lainnya membawa air kencing dan menyuruh Raul meminumnya. Awalnya dia menolak, tapi kemudian dia meneguknya karena dia tidak tahan dipukuli. Setelah Raul ditahan selama sembilan hari, keadaannya sangat buruk, sampai Bupati Aileu, Abel dos Santos Fatima, menemui komandan Kodim dan meminta pembebasan Raul. Raul mengatakan, dia dibebaskan tidak lama setelah pertemuan bupati dengan komandan Kodim itu.³⁸⁶

Penahanan karena ikut serta dalam serangan Falintil

369. Komisi menerima informasi beberapa kasus mengenai orang-orang yang ditahan karena terlibat dalam serangan Falintil terhadap sasaran-sasaran militer. Pada 1977 Camat Subdistrik Fatululik (Covalima), T267, memanggil Pedro de Jesus untuk datang ke kantornya. Setibanya di kantor T267, dia langsung dipukuli dan diinterogasi mengenai percobaan pengepungan Koramil dan perampasan senjata. Pedro de Jesus mengatakan kepada Komisi:

[Dia] kata saya seorang “bodoh” dan memasukkan saya dalam sebuah ruangan, di mana dia memukul saya dengan senjata, menginjak kaki saya dengan sepatu PDL [Pakaian Dinas Lapangan], sehingga kulit kaki saya terluka semua. [Mereka bilang] “Kamu mengaku saja, benar atau tidak kamu mau menyerang Koramil”. Tapi saya jawab begini, saya ini orang dato [seorang petinggi dalam sistem masyarakat tradisional], tapi saya orang rakyat, dengan apa untuk menyerang dan merampas senjata?” Saya katakan bahwa benar saya orang bodoh.

Setelah itu saya dipulangkan. Dan besok pagi datang lagi pesan camat ke kantor camat, tetap diperlakukan sama seperti hari pertama. Saya dipukul, ditendang hingga muka saya bengkak; dan pada saat kami dipukul oleh Pak Camat T267, Kapolsek dan Danramil duduk melihat saja, tanpa ada komentar sepele sekalipun.³⁸⁷

370. Demikian juga anggota-anggota ABRI menangkap XM dan keluarganya pada Juli 1977 karena dicurigai mempunyai informasi tentang serangan Fretilin terhadap tank tentara di Desa Guruça (Quelicaí, Baucau). Dia menggambarkan peristiwa tersebut:

Setelah beberapa hari kemudian, sekitar jam 7 malam, ABRI berjumlah delapan orang datang ke rumah saya untuk menangkap suami saya, Bale-Coo, dan ayah saya, Naito. Kemudian mereka dibawa ke pos Pasmar 9 [Pasukan Marinir] di Abafala [Quelicaí, Baucau]. Begitu mereka tiba di sana, kedua tangan suami dan ayah saya diikat dengan posisi ke belakang; lalu mereka berdua dipukul, ditendang dengan sepatu boneng, dipukul dengan popor senjata sampai pagi. Keesokan harinya suami dan ayah saya langsung dibawa ke Markas ABRI di Laga [Baucau].

Dua hari kemudian tiga orang TNI dan satu orang TBO datang menangkap lagi saya, adik saya Nacorica, kedua anak saya, Co`o Kita dan Dara Co`o, serta keponakan saya bernama Evaristo. Kami dibawa ke pos Pasmar 9 di Abafala. Sampai di sana kami semua diikat dan... pakaian kami ditanggalkan. Setelah diinterogasi, pada sore hari kami dibawa menuju ke Markas Pasmar 9 di SDN I Soba [Laga, Baucau]. Sampai di sana kami langsung diinterogasi.

Saat interogasi berlangsung saya disetrum dengan listrik dan pakaian ditanggalkan semua, setelah itu baru alat kelamin saya dibakar dengan korek gas. Saya mendapat perlakuan seperti itu atas perintah komandan Pasmar 9, T268. Saya ditahan di Markas Pasmar 9 di Laga selama satu minggu; setelah itu baru saya dibebaskan. Namun pada saat saya dibebaskan saya harus menjalani wajib lapor selama 6 bulan.³⁸⁸

Dilepas tetapi tidak bebas

Walaupun militer Indonesia membebaskan tahanan-tahanan politik dari pusat-pusat penahanan, militer mempunyai sejumlah strategi untuk mengawasi gerak-gerik mereka setelah dibebaskan. Di antara strategi-strategi itu ialah sebagai berikut:

‘Tahanan Luar’

Beberapa tahanan yang sudah dibebaskan dari tempat penahanan formal kemudian dikontrol melalui mekanisme yang disebut sebagai

‘tahanan luar’. Para tahanan ini diperbolehkan tinggal di rumah, tetapi masih di bawah pengawasan para penangkapnya. Sebagian harus melakukan kerja paksa, sementara yang lainnya diwajibkan untuk melapor secara teratur. Beberapa contoh, antara lain:

- Pada 1979 sekelompok laki-laki bernama Apolinario, Antero, João Brito, Filomeno, Januario Mendonça, Januario Cortereal, Orlando, Pedro, João da Silva, Marcos Lisboa, dan Mário Uca Bere menyerahkan diri kepada Yonif Linud 700 di wilayah Bubulau (Same, Manufahi). Batalion Infanteri Lintas Udara (Yonif Linud) 700 menyerahkan kesepuluh tahanan ini kepada sekelompok Hansip yang kemudian memukuli mereka habis-habisan dan menjadikan mereka ‘tahanan luar’. Apolinario, José da Silva, dan Marcos Lisboa diwajibkan menanam sayur-sayuran dan membangun rumah untuk seorang anggota Hansip, T269.³⁸⁹
- Pada 1980, menurut Alcino dos Santos Vinhos, militer menahan 14 orang di sekitar Lospalos (Lautém) dan menangkap mereka di Kodim Lospalos selama sembilan bulan. Setelah dibebaskan mereka diberi status ‘tahanan luar’ dan diwajibkan melapor ke Kodim tiga kali seminggu selama tiga bulan.³⁹⁰
- Pada 1994, milisi menahan 16 orang di sekitar Desa Babulu (Same, Manufahi). Mereka diinterogasi dan disiksa oleh Kopassandha di markas Kopassandha selama tiga hari sebelum dilepaskan dan menjadi ‘tahanan luar’ selama tiga bulan. Selama masa ini mereka harus mengangkut bahan-bahan bangunan dan merapikan rumput di luar rumah adat.

Wajib lapor

Wajib lapor tidak hanya berlaku bagi ‘tahanan luar’. Banyak tahanan politik diwajibkan melapor ke Koramil atau Kodim setempat secara teratur. Komisi tidak menemukan konsistensi atau pola yang jelas dalam penerapan sistem ini. Beberapa mantan tahanan diwajibkan melapor hanya setiap minggu selama beberapa bulan, beberapa orang harus melapor setiap hari selama beberapa tahun.

Kerja paksa

Satu cara lain untuk mengawasi mantan tahanan ialah dengan menggunakan mereka sebagai pekerja paksa. Ribuan laki-laki muda dipaksa bekerja sebagai TBO (Tenaga Bantuan Operasi) terutama selama akhir dasawarsa 1970-an dan awal dasawarsa 1980-an; yang lain direkrut sebagai anggota Hansip atau Ratih. Banyak mantan tahanan lainnya dimanfaatkan untuk membangun jalan, gedung desa, atau mengurus kebun.*

* Contoh, Bernardino dos Reis ditahan selama satu tahun setelah menyerahkan diri di Manufahi pada 1979 dan kemudian dipaksa membangun jalan dari perbatasan Turiscaj sampai ke Turiscaj bersama 200 pekerja paksa lainnya (Pernyataan HRVD 6626).

Rekrutmen paksa

Militer juga secara paksa merekrut banyak tahanan alih-alih membebaskan mereka. Komisi menerima pernyataan-pernyataan yang menggambarkan bagaimana para tahanan dipekerjakan sebagai TBO untuk melaksanakan tugas-tugas demi kepentingan militer Indonesia,³⁹¹ dipaksa mengikuti militer dan anggota-anggota Hansip ke gunung-gunung, untuk mencari orang-orang yang belum menyerah³⁹² atau untuk dijadikan informan.

Penahanan anggota klandestin

371. Di samping menjadikan individu-individu yang tergabung dalam Resistansi bersenjata sebagai sasaran, Komisi menerima banyak laporan mengenai militer yang menangkap dan menahan anggota-anggota jaringan klandestin atau individu-individu di daerah yang sudah dikuasai Indonesia, yang membantu Resistansi bersenjata dengan makanan, persediaan obat-obatan, atau tempat persembunyian.³⁹³

372. Gervasio Yosep ditangkap pada 1977 dengan alasan ini:

Saya ditangkap seorang RT bernama T271 dan enam orang anggota ABRI [Batalion] 511, dengan alasan bahwa saya menyembunyikan Falintil di rumah saya di Foholulik [Tilomar, Covalima]. Setelah ditangkap, saya dibawa ke markas Batalion 511 di Tilomar, setibanya di sana saya langsung dimasukkan ke dalam tahanan. Setelah itu baru diinterogasi, dan dalam proses interogasi saya dipukul dengan tangan dan kayu, ditendang; saya babak belur dan bercucuran darah. Saat itu saya disiksa selama duabelas jam, yakni dari pukul 2 pagi sampai pukul 2 sore baru berhenti. Setelah saya dipaksa makan dan minum obat, namun saya menolak, sehingga saya disuruh pulang kembali ke rumah.³⁹⁴

Terbongkarnya jaringan klandestin

António Junior Caleres mengatakan kepada Komisi mengenai perannya dalam sebuah jaringan klandestin yang berbasis di Dili yang memberi bantuan berupa makanan, obat-obatan, surat-surat, dan hal-hal lain kepada Resistansi bersenjata. António melakukan ini terutama melalui pekerjaannya di puskesmas, tetapi dia juga bisa mengirim obat-obatan dalam jumlah lebih banyak melalui pekerjaannya dengan Palang Merah.* Pada Maret 1977,

* Komisi Palang Merah Internasional (ICRC) tidak ada di Timor-Leste pada 1977, maka Komisi menganggap bahwa informan tersebut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia.

Palang Merah mempekerjakan dirinya pergi ke Gunung Kablaki dekat Same, untuk memberi obat-obatan kepada ribuan orang yang menyerahkan diri kepada militer Indonesia. António merawat orang-orang yang menyerah dan yang membutuhkan pengobatan itu, tetapi dia juga berhasil mengirim dua kotak obat-obatan kepada Falintil. Selama melaksanakan tugas yang sama di Suai sebulan kemudian, dia bisa mengirim lagi lima kotak ke Resistansi.

Jaringan itu akhirnya tersingkap setelah militer menangkap seorang pejuang Resistansi yang membawa dokumen-dokumen klandestin, termasuk daftar nama. Orang-orang yang namanya tertulis dalam daftar itupun ditangkap dan disiksa sampai mereka menyebutkan nama orang-orang lainnya, yang kemudian juga ditangkap.

Menurut António, kurang-lebih ada 200 orang yang akhirnya ditangkap dan dibawa ke Sang Tai Hoo dan Tropical. Namun tidak semua orang-orang ini adalah bagian dari jaringan itu:

[A]da nama-nama yang tidak ada [dalam daftar]. Tetapi karena orang-orang ini dipukuli dan disiksa habis-habisan, mereka mulai menyebutkan nama orang-orang secara acak. Itulah mengapa banyak orang-orang yang bukan klandestin, yang tidak bersalah, yang ditangkap.

Pada 16 Juli 1977, António ditangkap dan dibawa ke Sang Tai Hoo:

Saya disuruh masuk ke dalam, lalu melepas baju, hanya mengenakan celana dalam. Saya duduk beberapa menit, datang enam orang langsung tarik saya dan pukul sampai saya tidak sadarkan diri. Setelah saya sadar, saya sudah di dalam ruangan, saya melihat ada seorang Cina namanya Francisco Li dan juga dua orang Timor-Leste yang saya tidak tahu namanya. Saya lihat wajahnya sudah bengkak semua.

Setelah tiga hari, saya dipanggil untuk interogasi. Mereka hanya membaca apa yang sudah ada dalam dokumen dan bertanya mengapa saya kirim obat. “Ya,” saya mengaku bilang itu benar. “Saya kirim obat supaya mereka di hutan itu sehat, bisa datang. Karena kalian tentara ke sini dapat memimpin kami, percuma kalian datang hanya perang.” Satu orang lalu membalik kursi, saya tidur kaki ke atas, kepala ke bawah, dia taruh dua rokok Gudang Garam yang sudah dinyalakan dalam lubang hidung saya. Dia mengancam saya dengan pisau lalu bilang, “Kamu harus jujur dan sekarang kamu harus nyanyi lagu Foho Ramelau.” Saya terpaksa menyanyikan lagu Foho Ramelau. Jika saya hirup rokok itu saya langsung batuk. Setelah interogasi mereka sudah capek maka diambalnya helm besi, tutup kepala saya, baru kemudian dipukul badan saya dengan tangan. Jika saya sudah merasa tidak tahan, saya jatuh.

António Caleres menjelaskan bahwa kadang militer membawa para tahanan pergi dari tempat di mana mereka ditahan untuk menakut-nakuti mereka. Karena para tahanan politik tahu bahwa banyak

tahanan yang dibawa pergi pada malam hari dan tidak pernah kembali, pengalaman ini sangat traumatis:

Suatu malam saya dikeluarkan bawa ke Tasitolu, sampai di sana saya turun dari mobil lalu jalan, ada tentara empat orang yang membawa saya ke sana, mereka bilang pada saya, "Duduk di sini, kami cari angin dulu." Beberapa menit kemudian satu orang datang bawa kain hitam, ikat mata saya, dan bilang kepada saya, "Berdoa." Saya berdoa, hanya tunggu tembakan tapi tidak bunyi juga. Tunggu sampai dua jam, ngantuk juga saya, nyamuk juga banyak sekali. Mereka datang lagi, bilang, "Jalan! Kami ini masih orang baik." Kami naik mobil kembali lagi ke Sang Tai Hoo, tiba di Sang Tai Hoo jam 4 pagi. Hal seperti ini terjadi lagi. Saya dibawa ke Pasir Putih, Area Branca. Saya disuruh duduk di pinggir pantai, mata saya diikat, dan pakaian saya dilepas. Duduk selama mungkin dua jam, [kemudian] disuruh lagi naik mobil. Saya dibiarkan begitu saja, mungkin uji saya, jika saya lari mereka akan tembak mati.³⁹⁵

373. Faustino Amaral melaporkan kepada Komisi, pada September 1977 dia mulai melakukan kegiatan klandestin, walaupun pada saat itu dia seorang anggota ABRI.

Pada suatu hari Komandan Koramil Tutuala [Lautém], Deni Rohani, menemukan dokumen-dokumen rahasia di sebuah gua bernama Oi [Mehara, Tutuala, Lautém]. Dengan adanya pembongkaran tersebut, sejak itu keterlibatan saya dalam organisasi Klandestin diketahui. Beberapa hari kemudian saya disuruh menghadap ke Letkol Fransiskus Sumaryono di Kodim Lautém. Setelah menghadap, saya disuruh ke Korem Dili untuk menghadap lagi [Kolonel] Sahala Radjaguguk. Saat itu langsung dijemput oleh sebuah mobil jeep dan langsung dibawa ke Penjara Balide-Dili. Sesampainya di sana, dua anggota Korem menanggalkan semua pakaian saya kecuali celana dalam, lalu saya dimasukkan ke sel gelap selama satu minggu. Di dalam sel gelap tersebut, saya diinterogasi dan disiksa dengan cara jari kaki saya ditindih dengan sebuah meja selama satu jam, serta diancam oleh dua orang anggota ABRI, satu orang Indonesia, T272, dan satu lagi (nama tidak diketahui), dengan cara meletakkan sangkur di atas tubuh saya.³⁹⁶

374. Pada suatu hari, seorang tahanan bernama Alexandre melarikan diri dari tahanan di Comarca, Balide, Dili. Karena itu, Faustino Amaral dan 300 tahanan lainnya dipukuli oleh seorang tentara bernama T273. Mereka diperintahkan berkumpul di lapangan voli di dalam penjara dan lari mengelilingi lapangan.³⁹⁷

375. António Vieira bercerita kepada Komisi, dia ditangkap pada 3 Juli 1977 oleh seorang anggota intel dari Timor-Leste, T274, karena ada informasi yang mengatakan bahwa dia membantu Fretilin di hutan. Dia dibawa ke Sang Tai Hoo dengan taksi:

Alasan saya ditangkap karena ada informasi dari seseorang [namanya saya tidak tahu], bahwa saya sering memberi bantuan kepada para Fretilin di hutan. Setibanya di Sang Tai Hoo saya diinterogasi oleh komandan Topi Merah [Kopassandha] dan sambil disiksa. Jenis penyiksaan yang saya alami yakni: ibujari kaki saya ditindih dengan kursi, kemudian diduduki oleh dua orang anggota Topi Merah [Kopassandha], kening saya ditendang dengan sepatu militer, telinga saya ditinju, serta saya disandarkan ke tembok, baru dipukul dengan memakai pipa besi. Setelah itu baru saya ditahan di Sang Tai Hoo selama enam hari. Setelah itu saya dipindahkan lagi ke Penjara Balide dan ditahan di Penjara Balide selama empat bulan dua hari. Saya dibebaskan pada bulan Desember 1977. Walaupun sudah bebas tetapi saya masih berstatus 'tahanan luar' dan diharuskan untuk wajib lapor selama satu tahun.³⁹⁸

376. Kadang-kadang anggota Hansip juga terlibat dalam jaringan klandestin dan dihukum jika ketahuan. Eduardo da Silva mengatakan kepada Komisi, dia diperintahkan menjadi anggota Hansip pada 1976, tetapi tetap melakukan kegiatan klandestin, dengan menyalurkan barang-barang kepada Falintil melalui seseorang yang bernama Guilherme. Ketika intel militer menangkap dan menginterogasi Guilherme pada 1977, Guilherme memberi informasi mengenai jaringannya. Eduardo da Silva melanjutkan:

Karena itu saya ditangkap oleh Komandan Koramil dan dibawa ke Sang Tai Hoo. Di sana saya dipukuli dengan rotan dan wakil kepala intelijen memukul dada saya. Saya di sana selama tiga hari dan kemudian mereka memindahkan saya ke Comarca, tetapi saya langsung dibawa kembali ke Sang Tai Hoo untuk interogasi oleh dua anggota SGI [Intel -Satuan Gabungan Intelijen] hingga malam, ketika saya kembali ke Comarca. Tiap minggu selama tiga minggu, saya dibawa kembali ke Sang Tai Hoo untuk interogasi. Kasus saya diproses melalui pengadilan dan saya dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Selama menjalani hukuman, saya harus mencabut rumpuk dua kali seminggu.³⁹⁹

Interogasi seorang anggota klandestin

JN anggota sebuah jaringan klandestin yang terutama terdiri atas perempuan yang menggunakan *estafetas* (kurir) untuk mengirim makanan dan bahan-bahan lainnya dari desa kepada Fretilin di hutan. Kepala desa Akadiruhun (Dili), salah satu desa tempat jaringan klandestin itu beroperasi, mulai mencurigai JN dan teman-temannya dan melaporkan mereka kepada intelijen militer. Pada 29 Januari 1977, militer dan seorang Indonesia anggota intel, T800, menangkap

dan membawa JN ke Koramil di Culuhun (Dili). Kemudian dia dibawa ke Sang Tai Hoo; di sana dia diinterogasi oleh komandan ABRI T275 dan seorang sersan. Fransisco Benevides, seorang tahanan yang dapat berbahasa Indonesia, menjadi penerjemah. JN menggambarkan interogasi itu:

Saya diinterogasi tentang nama-nama, apakah saya kenal mereka, saya jawab, ya! Saya kenal mereka [para estafeta]. Saya tidak boleh berbohong karena saya menyuruh mereka. Maka teman-teman saya itu dilepas, saya tetap ditahan. [Para estafeta] telah memberitahu mereka saya yang bertanggung jawab dan saya terima...Di Sang Tai Hoo mereka suruh saya menggambar struktur organisasi, dengan isi nama-nama siapa yang duduk di tiap posisi. Lalu saya sebutkan namanya semua seperti KN dan lain-lain. Saya dipukul dengan ikat pinggang besi. Saya dipukul supaya cerita semua. [Para penginterogasi] pukul saya ganti-gantian. Satunya selesai, satu lagi mulai... Waktu saya di interogasi saya difoto, dengan hanya memakai celana dalam saja...

Setelah kira-kira seminggu di Sang Tai Hoo, JN dipindah ke Comarca:

Tanggal 9 Februari 1977, saya dipindahkan ke Comarca Balide...Saya menemani 'sel Maubutar', malam saya tidur di lantai tidak ada tikar. Mereka tarik saya punya rambut, tendang, siram air, dan wajah saya bengkak semua...Besoknya pagi tanggal 10 Februari, saya dibawa lagi ke Sang Tai Hoo dan...saya diinterogasi lagi, sore harinya saya dikembalikan lagi ke Balide-Comarca. Selama tiga malam saya tidur di 'sel Maubutar'. Jika kita di 'sel Maubutar', sampai satu minggu di sana, pasti kita akan dibunuh. Lalu saya dibawa ke ruangan sel besi. Setiap hari, saya diinterogasi terus, mereka datang dari Sang Tai Hoo bawa saya ke sana, baru kemudian diinterogasi. Di Comarca Balide saya diinterogasi dan dipukuli terus oleh polisi militer, baret merah [Kopassandha]. Saya di sel besi pada malam hari dipukul terus. Saya ditahan di situ selama tiga bulan dan tidak keluar kecuali untuk diinterogasi...LN dan KN ditahan bersama saya di sel besi...Kami bertiga disuruh mandi telanjang semua kayak anak kecil baru mereka [tentara] menonton...T276, seorang laki-laki Timor-Leste, datang bawa paku dan masukkan ke dalam celana dalam kami. Sesudah itu kami diperkosa sampai pagi. Dia dan tentara itu kompak, sehingga tentara itu tidak berbuat apa-apa...Setelah itu saya dipisahkan dengan LN dan KN. Pada bulan Mei barulah saya dipindahkan ke ruangan umum... Setelah saya di Comarca selama 16 bulan baru saya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 6 Juli 1978, tapi saya masih wajib lapor.'

* Wawancara CAVR dengan JN, Dili, 4 Oktober 2004. Lihat juga Wawancara CAVR dengan Bernarda dos Martires Carvalho Correia, Dili, 22 Januari 2003. Bernarda dos Martires Carvalho Correia bekerja sebagai seorang estafeta dalam jaringan yang sama dan juga ditangkap kurang-lebih pada saat yang sama dengan JN. Dia diinterogasi di Sang Tai Hoo dan ditahan di penjara Comarca selama tiga bulan. Dia tidak disiksa: "Menurut ABRI saya tidak usah disiksa karena saya hanya memberi barang-barang kepada anak

Penahanan karena anggota keluarga ada di hutan

377. Saudara dari orang-orang yang ada di hutan—baik yang ambil bagian dalam Resistansi bersenjata maupun yang hanya bersembunyi dari militer—juga menjadi sasaran penahanan. Militer berharap anggota keluarga ini dapat memberi informasi mengenai tempat persembunyian saudara mereka dan apa yang mereka lakukan. Juga, anggota-anggota Fretilin/Falintil menerima makanan dan persediaan-persediaan lainnya dari keluarga mereka dan militer ingin memutus hubungan mereka itu. Akhirnya, ini merupakan suatu bentuk ‘kekerasan perwakilan’—anggota keluarga mewakili menjadi pengganti penerima hukuman apabila sasaran utama kekerasan tidak dapat ditangkap.

378. Luis de Jesus menceritakan kepada Komisi, pada 30 Agustus 1977 dua orang tentara menangkapnya di Camea (Dili) dan membawanya ke Sang Tai Hoo karena dia dicurigai mengirim barang kepada anggota keluarganya di hutan:

[Kami] diinterogasi oleh anggota ABRI dari Satuan Topi Merah Nanggala [Kopassandha]. Selain diinterogasi kami juga dipukul dan ditendang. Kemudian pagi harinya kami dibawa ke Penjara Balide. Di sana semua pakaian kami dilepas dan kami ditinggal dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian para petugas penjara dan polisi militer memukuli kami dengan menggunakan kayu balok, besi beton, dan rantai [cabu de asu]. Kemudian dalam telanjang bulat kami dimasukkan dalam sel gelap, sempit, dan bau. Selama tiga hari berada dalam sel tersebut tanpa diberi makanan, kecuali kami hanya diberikan air panas pada pagi, siang, dan malam hari. Setelah tiga hari kami dikeluarkan dari sel gelap dan setelah memakai kembali semua pakaian, kemudian kami dimasukkan lagi dalam sel selama 6 bulan. Kami dibebaskan pada tanggal 15 Maret 1978.⁴⁰⁰

379. HN menceritakan kepada Komisi: pada 1979, ketika suaminya masih di hutan sebagai komandan Falintil, dia ditangkap dan dibawa ke Koramil Uatolari (Viqueque). Di sana, seorang anggota Hansip, T277, melepas pakaiannya dan seorang anggota Hansip lain, T278, menginterogasinya. Dia disuruh duduk memegang batang kayu yang penuh duri, ditampar, dipukuli, dan disundut rokok menyala. Kemudian Koramil membebaskan dirinya, tetapi menangkapnya kembali dua minggu kemudian bersama anaknya yang baru berusia satu tahun. Mereka dibawa kembali ke Koramil dan ibu itu diperkosa di depan anaknya yang menangis.⁴⁰¹

380. IN ditangkap di Ossu (Viqueque) pada 1979, karena beberapa anggota keluarganya aktif dalam Resistansi dan masih di hutan. Tentara ABRI T279, T280, T281, dan anggota Hansip T282, serta anggota intelijen T283 dan T255 membawa dia ke sebuah rumah milik seorang etnis Cina dan menginterogasinya:

.....
saya di hutan. Maka, hukuman saya lebih ringan daripada teman-teman saya dan beberapa pemuda yang juga ditangkap pada saat itu. Mereka disiksa habis-habisan oleh ABRI karena, menurut informasi yang diterima ABRI, mereka berencana untuk lari ke hutan.”

Dalam interogasi tersebut saya ditanya oleh T255 mengenai nama-nama anggota keluarga saya yang masih berada di hutan dan bagaimana kami mengadakan kontak dengan mereka. Saya menjawab dengan mengatakan kepada mereka bahwa “Hau la konyese sira! Oinsa ami bele hasoru malu, tamba hau hela iha vila no sira iha ai laran.” [Saya tidak mengenal mereka! Bagaimana kami bisa bertemu, sedangkan saya tinggal di kota dan mereka tinggal di hutan]. Jawaban itu membuat mereka emosi, tapi mereka tetap menuntut agar saya harus mengatakan hal yang sebenarnya. Kemudian T285 mengambil sebuah kayu balok dan pisau serta menunjukkan kepada saya sambil berkata, “Kalau kamu tidak mengakui, maka hari ini kamu akan mati.” Tidak lama kemudian keenam orang tersebut bergantian menyiksa saya. Mereka menggunakan senjata untuk menghajar, menghantam, dan menendang saya...Saya juga dihajar dan dihantam di bagian dahi, dan tubuh saya diiris dengan pisau hingga berdarah oleh T285. Setelah itu saya dipindahkan ke Koramil dan ditahan di sana selama tiga bulan.⁴⁰²

381. Setelah IN diinterogasi, istrinya diambil dari rumah mereka dan ditahan di tempat yang sama dengan dia. Selama dia diinterogasi, istrinya diperkosa di ruang sebelah oleh seorang Timor-Leste komandan peleton, T286. IN mengatakan kepada Komisi bagaimana dia mendengar istrinya berteriak meminta pertolongan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa.⁴⁰³

382. Komisi telah menerima informasi mengenai seorang laki-laki yang memutuskan tetap di hutan sementara keluarganya menyerahkan diri pada Agustus 1977. Setelah keluarga itu tiba di Mehara (Tutuala, Lautém), seorang anggota DPRD tingkat dua, T287, datang dan memberitahu ayah dan ibu lelaki itu supaya pergi ke pos militer di Mehara tengah untuk diinterogasi mengenai keberadaan sang anak. Interogasi berlangsung sepanjang malam dan mereka baru dibebaskan pukul 4 pagi dengan syarat mereka harus melapor selama dua minggu dan membawa informasi mengenai anak laki-laki mereka.⁴⁰⁴

383. Bahkan anggota keluarga orang-orang yang sudah ditahan, hidup dalam ketakutan akan kekerasan militer. António Vieira mengatakan kepada Komisi:

[Waktu saya ditahan di Dili], istri saya, bernama Elsa Soares Gomes, di rumah juga mendapat ancaman dari anggota Topi Merah [Kopassandha], bahwa saya telah dibunuh dan istri saya juga akan dibawa untuk dibunuh. Akibat ancaman tersebut istri saya terkejut dan jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1977. Saat istri saya meninggal Leandro Isaac meminta izin kepada ABRI agar saya dapat hadir pada upacara pemakaman istri saya.⁴⁰⁵

Penahanan setelah penyerahan diri atau penangkapan*

384. Rakyat Timor-Leste mulai menyerah kepada militer Indonesia sudah sejak terjadinya invasi. Mereka yang merasa tidak mampu lari ke gunung, seperti ibu yang menyusui atau orang-orang tua, tetap tinggal di rumah dan merupakan orang-orang pertama yang menyerah. Banyak yang lari ke gunung kemudian kembali dan menyerah karena mereka tidak tahan dengan kehidupan yang sulit di hutan. Komisi menerima pernyataan-pernyataan mengenai orang-orang yang menyerah setelah lari pada 1976 dan 1977. Namun demikian, jumlah orang yang menyerah sangat besar terjadi pada 1978 dan 1979, yaitu saat terjadi penyerahan diri secara massal dengan dukungan para pemimpin Fretilin.

385. Puncak penahanan dapat dilihat pada 1978, ketika terjadi penyerahan diri massal kepada militer Indonesia. Militer dihadapkan pada gelombang ribuan orang yang kebanyakan tiba di tempat-tempat yang bukan rumah mereka dan yang menderita sakit serta kurang gizi.⁴ Sebagian besar ditempatkan di kamp-kamp transit besar, tempat mereka diproses dan didaftar. Pasukan militer juga menyaring mereka yang menyerah untuk mengidentifikasi mereka yang anggota Fretilin/Falintil. Mereka yang dikenal sebagai anggota Fretilin/Falintil langsung ditangkap dan ditahan secara terpisah dari kelompok. Banyak orang lainnya diinterogasi tentang apa yang mereka lakukan di hutan. Mereka kemudian ditahan lebih lanjut, dimasukkan ke kamp transit, direkrut sebagai TBO atau Hansip, atau dilepas kembali ke desa mereka. [Lihat Bab 7.3: Pemandangan paksa dan kelaparan.]

Penyerahan awal

386. Seorang perempuan Timor-Leste melaporkan, bahwa dia dan keluarganya menyerahkan diri pada 1977 setelah dua tahun bersembunyi di gunung, karena kekurangan makanan dan obat-obatan menyebabkan kematian lima adik laki-laki dan perempuannya. Setelah menyerah, seluruh keluarganya langsung ditangkap.⁴⁰⁶ Pada saat dalam tahanan, ayahnya dibunuh, telinganya dipotong dan dijadikan hiasan sebagai tanda kenangan. Keluarga itu kemudian dibawa ke Kota Soibada (Manatuto) dan ditahan di sana selama beberapa hari.⁴⁰⁷

387. Pada 1977, José da Conceição Carvalho, seorang anggota Falintil, menyerahkan diri kepada dua agen intel di Dili bernama T292 dan T293. Dia langsung diserahkan kepada seorang tentara dengan nama panggilan T294 untuk diinterogasi di Palapaço (Dili) dan ditahan selama 12 hari. Ia bertutur kepada Komisi:

* Istilah 'menyerah' biasanya diperuntukkan bagi pejuang dan bukan bagi penduduk sipil. Akan tetapi dalam Laporan istilah ini digunakan untuk menggambarkan perbuatan penduduk sipil, karena 'menyerah' adalah kata yang digunakan oleh penduduk sipil itu sendiri dalam menggambarkan perbuatannya, dan karena apa yang terjadi pada hakikatnya merupakan perbuatan politik keluar dari kekuasaan Fretilin/Falintil dan memasuki kekuasaan militer Indonesia. Secara praktis, 'menyerah' berarti melapor ke komando militer setempat dan didaftar. Sering orang ditahan di tempat penampungan sementara untuk diproses sebelum dibebaskan dan pulang. [Lihat Bab 7.3: Pemandangan Paksa dan Kelaparan.]

† Sebagai contoh, di Uato Carbau (Viqueque) banyak orang dari Ossu (Viqueque), Uatolari (Viqueque), dan Bagaia (Baucau) yang menyerah kepada militer Indonesia dan ditahan di tempat-tempat seperti Koramil Uato Carbau. [Wawancara CAVR dengan Xisto Fernandes (alias Helio Espiritu Santo), Uato Carbau, Viqueque, November 2003.]

Saat investigasi saya terpaksa mengaku tempat persembunyian senjata, sehingga ABRI yang bernama T294 menyuruh dua anakbuahnya [T292 dan T293] untuk mengambil senjata tersebut. Kemudian saya dibebaskan, namun tidak langsung ke rumah, melainkan tinggal dengan T294 sampai 1979. Setelah itu baru saya diperbolehkan untuk kembali ke rumah saya.⁴⁰⁸*

388. Selain menyerahkan diri secara sukarela, penduduk sipil juga menyerahkan diri atau kadang ditangkap ketika militer menawan mereka dalam sebuah operasi. José Rosa de Araújo, seorang anggota Fretilin, mengatakan kepada Komisi bahwa dia berjuang sebagai gerilya di Gunung Kablaki di daerah Ainaro setelah invasi Indonesia. Pada 1977 Yonif 125 menyerang daerah Gunung Kablaki, yang mengakibatkan penangkapan 80 anggota Fretilin, termasuk José Rosa de Araújo. Dia mengingat:

Di lokasi penangkapan, seorang Hansip bernama T295 melakukan penganiayaan terhadap saya dengan cara: ditinju, ditendang, dan dipukul dengan popor senjata. Selanjutnya 20 orang Hansip juga ikut melakukan penganiayaan terhadap saya dan pasukan Fretilin lainnya hingga babak belur. Ketika itu juga pasukan Hansip dan Yonif 125 mendirikan pos-pos mereka di Gunung Kablaki [jumlahnya lima pos], lalu saya bersama pasukan Fretilin lainnya ditahan selama satu tahun di Pos Hansip dan Yonif 125 di Kablaki. Saat itu kami dipaksa untuk masuk sebagai TBO, dengan tugas pergi mengambil beras atau jagung di Dare [Ainaro] di mana setiap dua orang harus membawa 100 kg dari Dare menuju ke Kablaki. Kegiatan ambil beras itu berlangsung selama satu tahun. Selama ditahan dan menjadi TBO, saya dan teman-teman hanya dikasih makan sayur-sayuran, sementara Hansip dan Yonif 125 makan makanan yang enak.⁴⁰⁹

389. Baik penduduk sipil dan anggota Falintil ditangkap selama operasi-operasi tersebut. Tetapi, setelah tertawan, anggota Falintil dipisahkan dari kelompok untuk menjalani penahanan lebih lanjut. Pada 22 Februari 1977 tiga anggota Falintil kehabisan amunisi lalu mereka ditawan bersama orang-orang Casohan di Barique (Manatuto) oleh anggota Yonif 631. Mereka diinterogasi oleh Yonif 631, senjata mereka disita. Penduduk sipil diizinkan pulang tetapi anggota Falintil ditahan di Casohan selama sebulan dan diinterogasi lebih lanjut serta disiksa.⁴¹⁰

* Alasan untuk ini tidak jelas tetapi mungkin termasuk dalam kapasitas sebagai TBO.

Cerita penerjemah Timor-Leste selama interogasi

António Peloy adalah anggota Hansip sekaligus penerjemah untuk militer Indonesia saat interogasi terhadap tahanan di Distrik Baucau. Ia menuturkan kepada Komisi mengenai cara-cara interogasi termasuk usaha dia untuk melindungi mereka yang diinterogasi:

Saya menjadi Hansip sekitar tahun 1976 di Laga, Baucau. Awalnya saya sebagai Hansip biasa yang membantu dan menjaga malam di pos-pos, sedangkan pada tahun 1978 baru saya mulai menangani penahanan. Waktu itu komandan Marinir bertanya, siapa yang bisa bahasa Indonesia, tidak lancar pun tidak apa-apa, yang penting apa yang diucapkan bisa dimengerti. Saya belajar bahasa Indonesia sebelum orang Indonesia datang di Timor dan saya bisa berbahasa Indonesia karena waktu itu rumah saya dekat pantai. Jadi saya sudah lama bergaul dengan orang-orang Indonesia yang datang dengan perahu untuk berdagang di sini.

Waktu itu saya sebagai tim penerjemah Marinir Pasmar 9. [Selama interogasi] yang hadir di situ hanya saya dan satu orang militer saja. Yang menulis itu Marinir sendiri dan pertanyaan yang diajukan untuk tahanan, saya yang terjemahkan untuk mereka dan nanti jawabannya juga saya yang sampaikan pada Marinir. Semua penahanan mana yang tentara Indonesia tangkap itu semua diserahkan kepada saya. Saya punya tanggung jawab satu ruangan berjumlah 110 orang tahanan. Tahanan-tahanan itu dari daerah Ossu [Viqueque], Viqueque, Baucau, Venilale, Quelicai [semua di Distrik Baucau], dan dari Desa Maina II [Lautém]. Antara mereka ada anggota Fretilin dan juga masyarakat biasa yang mau menyerah. Mereka memang ada niat untuk menyerah tapi tetap diperiksa dan dipukul, namanya juga militer tidak main-main.

Perlakuan pasukan Pasmar terhadap tahanan beda antara perempuan dan laki-laki. Itu begini. Kalau untuk tahanan laki-laki investigasinya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang, sedangkan untuk perempuan waktu untuk investigasi dari jam 7 malam sampai jam 2 malam. Itu mereka [perempuan] ditanya, “Kamu sudah punya suami belum?” [Mereka menjawab:] “Saya sudah punya suami.” “Suami sekarang di mana?” “Sekarang masih tinggal di hutan.” “Dia di sana pekerjaannya apa?” Lama-lama bilang “Kamu bohong. Kamu punya suami di hutan, Fretilin/GPK.” Atau mereka bilang “Kami di sini dengar kamu itu ada gambar bendera Fretilin di susu.” Lalu disuruh buka baju, terus dia angkat baju ini mulai lihat dari bawah sampai atas nanti periksa agak lama, nanti dibilang lagi “Katanya di perut. Itu sarungnya diturunkan, coba sarungnya diturunkan di sini. Kalau bukan di susu mungkin di perut”. Nanti setelah di perut lama-lama

kami dengar katanya di sini ada di atas pusar (di atas kemaluan).

Kalau laki-laki jika ditanya “Kamu GPK? Kamu bersenjata? Mulai tanggal berapa, bulan berapa? Terakhir pegang senjata tahun berapa? Tanggal berapa? Bulan berapa?” Dan mereka ditanya lagi mengenai kejadian di Matebian. Mereka akan berak kencing, dipukul, disetrum, melalui pasang telepon [listrik] di telinga dan di jari. Orangnya guru di Lospalos, namanya José Lima mendapat [perlakuan] berat karena dicurigai terlibat dalam pemboman tank Marinir di Quelicai. Dia dimasukkan di dalam drum dengan kepala ke bawah kaki ke atas, hingga tahinya keluar. Sedangkan kakinya diikat di batu besar dan dinaikkan ke atas. Tapi dia tidak mati.

Walaupun saya ikut tentara Indonesia, saya menyelamatkan teman-teman dari hutan melalui interogasi...Di interogasi mereka ditanya, apakah yang mereka lakukan di hutan? Apakah mereka pegang senjata atau membunuh tentara Indonesia? Karena disetrum, mereka kadang-kadang mengakui pegang senjata atau membunuh tentara di hutan, tapi saya bantu tutupin. Jadi sebelum jam 8 pagi saya sudah buka pintu sedikit dan saya berikan para pengarah mengenai “nanti akan diperiksa panggil satu-satu. Tapi kalau kalian salah bicara, kakimu tetap di bawah kaki saya. Kalau kamu omong salah...kaki saya turun dulus kaki kamu dan kamu langsung berhenti bicara. Saya bicara dulu sama tentara itu. Tapi kalau kamu salah, saya berdiri pukul.”

Misalnya, kalau mereka mengakui benar-benar membunuh tentara, saya mengganti katanya terhadap pasukan Indonesia. Supaya mereka tidak dapat dibunuh dan langsung bilang sama para korban dalam bahasa Tetum atau Makasai: “Jangan omong begitu, nanti akan dibunuh.” Saya sengaja langsung memukul teman-teman saya, supaya mereka tidak dicurigai dan juga saya tidak dicurigai sebagai musuh dalam selimut. Tentara/marinir tanya kenapa saya memukul mereka dan saya bilang bahwa dia tidak mengakui tentang pembunuhan. Setelah dipukul saya memasukkan kembali mereka di tempat penahanan, saya minta maaf saya pukul, bilang: “Tidak sampai sakit hati, tapi saya membantu kalian supaya tidak dibunuh tentara Indonesia.”¹¹

Penyerahan diri secara massal: 1978-1979

390. Menyusul hancurnya *Zona Liberdade* (Daerah Bebas) terakhir di Gunung Matebian, penyerahan diri massal terjadi di sepanjang wilayah timur Timor-Leste (lihat Bab 7.3: Pemandangan paksa dan kelaparan). Kelompok-kelompok lain di daerah tengah dan barat juga mulai menyerah. Sekali lagi, dilakukan proses penyaringan memisahkan individu-individu yang diketahui sebagai pemimpin-pemimpin Fretilin; mereka langsung ditangkap. Yang lainnya diinterogasi secara intensif untuk memastikan tentang peran mereka atau apakah mereka dapat memberikan informasi yang berguna.

391. Selain anggota militer, pegawai pemerintah sipil, Hansip, dan kadang penduduk biasa membantu melakukan penangkapan dan mengidentifikasi mereka yang perlu diinterogasi lebih lanjut. Misalnya, setelah menyerahkan diri di Kota Uato Carbau pada 1978, T297, seorang penduduk sipil, melaporkan Xisto Fernandes kepada seorang Hansip, T298, sehingga dia ditangkap dan ditahan di Koramil Uato Carbau.⁴¹² Celestino Manuel Pinto mengatakan kepada Komisi, dia ditangkap pada 23 November 1978 oleh usaha gabungan antara karyawan pemerintah setempat, Hansip, polisi, dan militer, ketika dia turun dari Gunung Matebian dekat Uato Carbau dan menyerah di Desa Bahatata (Uato Carbau, Viqueque):

Saat itu camat [Uato Carbau], T299 dan wakilnya T300 yang mengoordinir dengan Komandan Hansip T301 [alm.] dan anggotanya T302 serta Komandan Polisi dan Komandan Koramil untuk melakukan penangkapan terhadap saya dan dua orang teman bernama Alfredo Pires dan Caetano Quintão. Kami bertiga dimasukkan ke dalam penjara, karena saat di hutan saya sebagai anggota pasukan Falintil. Saya mulai ditahan pada tanggal 1 Januari 1979 di Afaloicai [Uato Carbau, Viqueque]. Saat itu yang menjadi tahanan ABRI, saya dan warga masyarakat sekitar 130 orang. Dari jumlah tahanan yang ada berasal dari enam desa, Irabin de Baixo, Irabin de Cima, Uani-Uma, Lo-Ulu, Afaloicai, dan Bahatata, semua di Kecamatan Uato Carbau. Dalam tahanan kami juga dipaksa untuk bekerja. Jenis pekerjaan yang dilakukan ketika itu seperti mengangkat mobil Jeep dari Uatolari menuju ke Desa Afaloicai... mengangkat bambu, membuat jalan raya dari Ringgit Baru sampai ke Afalocai dan mengambil batu, kayu untuk membangun rumahnya Pak Camat T299. Kami ditahan sampai tahun 1980 baru dilepaskan. Pada saat dilepaskan, kami diharuskan untuk melakukan wajib lapor selama satu setengah tahun. Setelah itu baru kami dibebaskan total.*⁴¹³

392. Komisi mengadakan pertemuan di desa-desa di seluruh Timor-Leste dan mencatat pengalaman tiap komunitas. Profil Komunitas berikut ini menceritakan beberapa kisah penyerahan diri dan penangkapan massal pada 1978 dan 1979 dan berbagai pengalaman komunitas yang menyerahkan diri yang berbeda-beda:

.....
* Nama sebuah desa yang diberikan selama pendudukan Indonesia.

Tabel 6: Berbagai pengalaman penyerahan diri dan penangkapan massal komunitas, 1978-1979

| Komunitas | Tanggal | Menyerah | Ditahan | Interogasi/Penyiksaan |
|---|-----------------------|---|--|---|
| Remexio (Aileu) ⁴¹⁴ | 1979 | Warga masyarakat menyerahkan diri | Semua laki-laki ditahan oleh anggota ABRI, Hansip dan Partisan. Belakangan, 20 orang lagi (perempuan dan laki-laki) juga ditahan. Jumlah total para tahanan sekitar 100. | Ditahan dan diinterogasi selama dua minggu kemudian dikirim pulang. |
| Uma-Kiik (Viqueque) ⁴¹⁵ | 1978 | Beberapa orang menyerahkan diri kepada Batalion 202 dan yang lainnya kepada Batalion 745. | Batalion 202 menahan semua orang karena dicurigai sebagai Falintil. Yonif 745 membawa mereka semua ke kota. | Batalion 202 menyiksa orang-orang, memperlakukan perempuan sebagai budak seks dan menjadikan laki-laki sebagai TBO. Yonif 745 menyuruh orang-orang untuk memotong rumput setiap hari. |
| Caisido (Baucau) ⁴¹⁶ | 1978 | Warga masyarakat Caisido dan orang-orang dari desa lain menyerahkan diri di kota Baucau dan di desa-desa Trilolo, Triloka, Bucoli, Vemasse (Baucau). | Delapan pemimpin Fretilin ditahan di Hotel Flamboyan, Baucau selama enam bulan. | Disiksa tetapi tidak diinterogasi. |
| Molop (Bobonaro) ⁴¹⁷ | 17 Apr. 1978 | 370 orang menyerahkan diri kepada Batalion 612. | 20 orang ditahan karena dicurigai sebagai Falintil. | Ditahan selama tiga bulan di gedung polisi militer tanpa makanan. Disundut rokok, dipukul dengan palu dan senjata, kuku-kuku dicabut dengan tang, ditelanjangi, dan direndam dalam air selama 24 jam. |
| Marobo (Bobonaro) ⁴¹⁸ | 1978 | Warga masyarakat menyerahkan diri kepada pasukan Batalion 612. | Semua ditahan, termasuk komandan Fretilin Kompi Bobonaro, João de Jesus. | Direndam di kolam renang selama dua bulan. Beberapa tahanan kemudian dibebaskan dan sekitar 90 penduduk sipil dijadikan TBO. |
| Bahatata (Uato Carbau, Viqueque) ⁴¹⁹ | 22-23 Nov. 1978 | Banyak orang yang menyerahkan diri kepada Batalion 328 dekat Samalari (Uato Carbau, Viqueque). Kemudian satu peleton Falintil dan 19 orang lainnya menyerahkan diri kepada Batalion 328 dan Hansip dekat Samalari | Batalion 328 memeriksa harta benda orang-orang dan membawa orang yang dicurigai sebagai pemimpin ke Koramil. Peleton Falintil dan 19 orang lainnya ditahan. | Pemimpin yang dicurigai diinterogasi dan kemudian dibebaskan. Anggota-anggota Falintil dan 19 orang lainnya dipukuli, ditendang, disundut dengan rokok oleh seorang Hansip bernama T329. Semua dijadikan TBO. |

| | | | | |
|---|------------|--|--|---|
| Desa Dato (Liquiçá) ⁴²⁰ | 1979 | Sebagian besar orang dari Dato menyerahkan diri kepada Kodim 1638 di Liquiçá. | 18 komandan peleton ditangkap. | Ditahan oleh T284 di Koni, Liquiçá. Disiksa dengan dipukul dan dipaksa membangun sebuah 'rumah hiburan' |
| Hatura, Nasolan, Isolada (Aileu) ⁴²¹ | 1979 | 280 orang menyerahkan diri di Damata kepada Batalion 712, Linud 100, Linud 700, dan Linud 721. | Tidak ada yang ditahan. Harta benda orang-orang digeledah, kemudian semua dibawa ke Malere (Aileu) diberi makan dan dipulangkan. | - |
| Uato-Haco (Venilale, Baucau) ⁴²² | Sept. 1979 | Warga masyarakat Uatu-Haco dan Uahilaha menyerahkan diri kepada ABRI di Venilale. | Pemimpin dan yang dicurigai sebagai pemimpin di hutan ditangkap. | Dua orang ditahan dan diinterogasi di Hotel Flamboyon, Baucau. 11 orang ditahan di pos militer di Venilale dan dipaksa membangun rumah-rumah. |

393. Francisco da Costa dipisahkan dari kelompoknya ketika dia dan keluarganya menyerahkan diri di Uatolari pada 1978, setelah tinggal di Gunung Matebian selama dua tahun. Dia menceritakan pengalamannya kepada Komisi:

Saat saya menyerah, saya langsung ditangkap oleh seorang laki-laki Timor-Leste, T305 dan orang-orang dari Intel Kopassandha. Pada waktu penangkapan itu saya ditinju, ditendang, dan dipukul dengan kayu di bagian kepala, sampai saya tidak sadar, tidak bisa berdiri, sehingga saya hanya diseret masuk ke dalam penjara. Alasan saya ditangkap karena waktu di hutan saya bekerjasama dengan Delegado [utusan] Fretilin bernama Lequimau dan melarang masyarakat untuk menyerah kepada ABRI.

Kemudian keesokan harinya Hansip T306 datang bersama tentara Timor-Leste, perempuan 3 orang yakni T307, T308, dan T309. Lalu Hansip T306 menyuruh mereka bertiga untuk memukul saya dengan kayu hingga berdarah. Setelah itu mereka [T306 dan ketiga prajurit] memaksa kami masuk ke dalam air selama 24 jam. Keesokan harinya kami diserahkan kepada Koramil dan Kepala Desa Afaloicai Agostinho Ribeiro yang harus bertanggung jawab dan memperhatikan kami berempat.⁴²³

394. Kondisi tempat penahanan para tahanan pada periode ini sering sangat mengerikan. Satu contoh tentang ini ialah kesaksian Mário Maubuti. Mário Maubuti mengatakan kepada Komisi bahwa dia dan dua ipar laki-lakinya, Maubuti dan Beremau, turun dari gunung dan menyerahkan diri kepada tentara di Leimea Kraik (Hatolia, Ermera) pada 1978. Mereka langsung dibawa ke Kota Atsabe (Atsabe, Ermera) dan ditahan di sana bersama beberapa orang lainnya:

Setibanya di Atsabe kami semua yang ditangkap dan dibawa pada saat itu, dimasukkan ke dalam lubang tanah dan hanya diberi makan sekali dalam sehari, itupun diberikan secara umum, sehingga kami yang sebagai tahanan harus saling berebut makanan yang diberikan tersebut, bahkan ada yang tidak kebagian makan. Sebab kami sangat lapar dan makanan yang diberikan tersebut jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah tahanan. Dalam lubang kami hanya berdesakan, sehingga saat musim hujan kami hanya tidur di atas lumpur dan genangan air selama delapan hari, baru dibebaskan.⁴²⁴

395. Kondisi-kondisi di kamp transit juga luarbiasa buruk dan banyak orang mati. (Lihat Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan.)

Penahanan di Kamp *Uma Metan*, Alas, Manufahi

Uma Metan (Tetum: Rumah Hitam) adalah sebuah kamp militer Indonesia yang didirikan sebelum Agustus 1978, di dekat Alas (Manufahi), sebagai basis untuk melaksanakan operasi-operasi melawan Resistansi di gunung-gunung sekitar Distrik Manufahi. Batalion Linud 700, Yonif 744, 745, dan 310, Nanggala (Kopassandha) dan Koramil Alas ditugasi di *Uma Metan*. Kamp itu juga digunakan sebagai kamp transit untuk menampung orang-orang yang menyerahkan diri dari daerah-daerah sekitarnya dan menahan orang-orang yang dicurigai sebagai anggota Resistansi.

Komisi mewawancarai beberapa bekas tahanan dari Kamp *Uma Metan*. Tomé da Costa Magalhães yang ditahan di sana pada 1978, menggambarkan *Uma Metan* sebagai bukit yang berketinggian kurang-lebih 300 meter. Mateus da Conceição yang ditangkap pada 8 Mei 1979 dan ditahan di *Uma Metan* selama tiga bulan, memperkirakan bahwa di kamp itu terdapat kurang-lebih 8.000 orang dari berbagai tempat termasuk Aileu, Maubisse, Same, Ainaro, Manatuto, Dili, Liquiçá, dan Viqueque. Baik Tomé maupun Mateus menceritakan bahwa kehidupan di *Uma Metan* amat sulit. Setiap hari banyak orang yang mati akibat kelaparan dan penyakit seperti diare, TBC (tuberkulosis), dan beri-beri. Mereka juga menceritakan tentang sekolah yang didirikan di *Uma Metan* dengan tujuan agar tahanan bisa belajar bahasa Indonesia, tetapi juga digunakan pada malam hari oleh anggota Nanggala, Linud 700, dan Koramil untuk memerkosa perempuan.⁴²⁵ Kamp tersebut ditutup sekitar Januari 1982.

Tidak seperti kamp-kamp transit lainnya, Uma Metan juga digunakan sebagai penjara untuk orang-orang yang kedapatan bekerja untuk Resistansi. Orang-orang ini kadang ditemukan di antara mereka yang menyerahkan diri dan kadang tertangkap di hutan dan kemudian dibawa ke kamp untuk interogasi.⁴²⁶ Banyak anggota Resistansi yang dibunuh dan dieksekusi (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Yang lainnya dimanfaatkan sebagai pekerja paksa atau untuk mencari anggota-anggota Resistansi lainnya. Beberapa penghuni kamp setelah menghabiskan beberapa bulan di Uma Metan, dipindahkan ke tempat lain, seperti Koramil Same (Manufahi) untuk interogasi lebih lanjut.⁴²⁷ Yang lainnya dipaksa bekerja untuk militer atau menjadi TBO.⁴²⁸

Saturnino Tilman yang ditangkap oleh Yonif 745 pada 28 Februari 1979 di Fatukuak, Betano (Same, Manufahi), dibawa bersama temannya Ijidoro, ke Uma Metan dengan helikopter. Tentara kemudian menyerahkan dia kepada Linud 700. Dia diinterogasi dengan dibantu oleh seorang Hansip sebagai penerjemah. Anggota Linud 700 menanyakan tentang kekuatan Falintil dan jenis-jenis senjata yang digunakan Falintil. Dia tidak dipukuli selama interogasi. Tetapi setelah itu dia disuruh melepas pakaiannya dan tidur di lapangan menghadap Matahari selama beberapa jam. Saturnino kemudian ditahan di sebuah rumah selama sepuluh hari dan hanya mendapat makan satu kali sehari. Temannya, Ijidoro diikat pada sebuah pohon. Saturnino juga menceritakan kepada Komisi bagaimana militer membariskan beberapa orang dan menyuruhnya mengidentifikasi mereka. Tapi, dia selalu berkata bahwa dia tidak mengenali mereka. Setelah interogasi dia diserahkan dari Uma Metan kepada Koramil Alas yang menyuruhnya membuat jalan, bersama dengan 200 tahanan lainnya.⁴²⁹

Tomé da Costa Magalhães menceritakan tentang 77 penduduk sipil (tidak satupun dari mereka anggota Falintil) yang menyerahkan diri setelah operasi militer di Fahinehan (Fatuberliu, Manufahi) dan ditangkap oleh Yonif 745 dan Linud 100. Para tahanan itu dibawa ke Uma Metan, dan di sana mereka dipaksa membangun rumah, gedung sekolah, dan sebuah ruang pertemuan.

Mateus Pereira melaporkan kepada Komisi bahwa dia dikirim ke Uma Metan dua bulan setelah menyerahkan diri di Betano (Same, Manufahi). Dia dan 12 orang lainnya disuruh berjalan menuju kamp yang dijaga oleh anggota Hansip pada 5 Maret 1979. Ketika mereka tiba, seorang komandan Kopassandha memberitahu mereka bahwa tujuan mereka di kamp untuk bersekolah dan membantu mencari para pemimpin Fretilin/Falintil di hutan, termasuk José Maria (Mausiri) dan Eduardo dos Anjos (Kakuk). Mereka diinterogasi sendiri-sendiri mengenai apa yang mereka lakukan di hutan dan

diberi peta serta surat jalan dan diberitahu untuk mencari para pejuang di daerah-daerah tertentu. Kebetulan mereka bertemu dengan Mausiri, Kakuk, dan Ermelita Coelho (Sirilau) di Kolokou, Desa Dotik (Alas, Manufahi). Para pejuang ini memberitahu Mateus dan kelompoknya bahwa mereka siap menyerahkan diri dan menyerahkan dua senjata untuk dibawa kembali sebagai bukti. Ketika Mateus melaporkan hal ini di Uma Metan, satu kompi Nanggala berangkat menjemput para pejuang Resistansi yang menyerahkan diri tersebut dan Mateus serta kerabat-kerabatnya pun diberi surat jalan untuk kembali ke desa mereka.⁴³⁰

Penangkapan komunitas 1978-1979

396. Komunitas-komunitas yang ditangkap oleh militer sebelum mereka menyerahkan diri mengatakan kepada Komisi tentang perlakuan terhadap mereka, yang lebih kejam daripada perlakuan terhadap orang-orang yang menyerahkan diri. Komunitas di Uamoritula, Uaimori (Viqueque, Viqueque), mengatakan kepada Komisi pada 1979 Batalion 745 menangkap sekitar 20 penduduk Uamoritula dan menahan mereka di Laleia (Manatuto), karena dicurigai bekerjasama dengan Resistansi. Sebagian dari mereka yang tertangkap kemudian dibunuh dan sebagian diperkosa dalam perjalanan menuju Laleia.⁴³¹ Sebuah komunitas lain, yaitu komunitas Manetu (Maubisse, Ainaro) menceritakan bahwa pada 1979 penduduk sudah ingin menyerahkan diri di desa mereka, tetapi takut terhadap militer di sana. Sebelum mereka membuat keputusan, tentara sudah menangkap mereka di Turisca (Manufahi) dan langsung memukuli mereka, kemudian memperkosa dua orang perempuan dari kelompok itu. Mereka kemudian dibawa ke Maubisse, di sana mereka dipukuli dengan kejam dan diinterogasi selama tiga bulan mengenai keadaan Falintil di hutan.⁴³²

397. Jacinto Alves mengatakan kepada Komisi mengenai penangkapannya bersama 40.000 penduduk sipil di daerah Ilimano (Laclo, Manatuto). Dari kelompok ini, hanya sekitar 26 orang yang dibawa untuk diinterogasi:

Movimento Torneante adalah gerakan berkeliling. Selama hampir tiga bulan kami berkeliling daerah di Fatubutik, Aikurus, kemudian Hatukonan [semua di Laclo, Manatuto], kemudian kami kembali ke tempat kami mulai. Kami diserang dari udara dan dari darat dengan mortir...Logistik samasekali tidak ada, bantuan apapun juga tidak ada...Tanggal 27 Juli 1978 kami, sekitar 40.000 orang, ditangkap di daerah Ilimano. Semua orang disuruh turun ke Metinaro [Dili]. Mereka datang menangkap saya bersama komandan kompi Falintil, Vicenti Alin, dan mereka bawa saya ke pos Kompi B, Batalion 315.⁴³³ Saya bersama dengan 26 orang, di antaranya orangtua saya, oom saya, dan lainnya, kami dikumpulkan, hanya saya yang dibawa untuk diinterogasi. Sesudah itu 26 orang di antara kami dibawa ke Metinaro

untuk tinggal di kamp bersama penduduk setempat. Saya sendiri di pos komando Batalion 315. Saya dipukul pakai senjata...Semua orang dilepas...saya sendiri di dalam sebuah rumah darurat, yang dibikin dari ranting-ranting melaleuca (kayu putih).

Dua atau tiga hari setelah itu mereka mengambil Micato [istri saya] bersama kakak saya, ibu mertua, dan ibu saya untuk diinterogasi di tempat saya ditahan. Kami saling pandang tetapi tidak diizinkan berbicara.⁴³⁴

398. Francisco Xavier do Amaral, presiden pertama Fretilin dan RDTL, ditangkap di pantai selatan di Distrik Viqueque pada Oktober 1978. Dia sebelumnya ditahan oleh Fretilin selama 13 bulan. Setelah Fretilin lari dari pasukan Indonesia, para tahananpun lari bersama mereka. Ketika Yonif 744 mengepung kamp Fretilin, Xavier do Amaral terlalu lemah untuk lari dan jatuh ke rumput. Dia ditangkap dan diterbangkan ke Dili untuk bertemu dengan Kolonel Dading Kalbuadi.⁴³⁵

Penahanan setelah pulang

399. Tidak semua orang langsung ditangkap setelah menyerahkan diri; beberapa orang ditangkap setelah mereka kembali ke rumah. Kadang hal ini terjadi karena militer dan pembantu-pembantunya memperoleh beberapa informasi mengenai orang tersebut, melalui sistem intelijen pengawasan komunitas. Americo da Costa mengatakan kepada Komisi bahwa pada 1979 dia dan keluarganya turun dari Gunung Matebian dan menyerahkan diri di Subdistrik Moro (Lautém). Karena mengalami kesulitan untuk mendapat makan, Americo da Costa mulai menanam sayuran di Soru-Uaku di Desa Maina I (Moro, Lautém). Pada suatu hari ketika dia sedang mengurus kebunnya, dia bertemu dengan seorang saudara yang belum menyerahkan diri:

Saat saya sedang buat kebun, tiba-tiba ipar saya [Sere] dan temannya Lourenço muncul di kampung Serelau [Moro, Lautém]. Saat itu mereka berdua masih berstatus anggota Falintil dan tinggal di hutan dan belum menyerah. Ketika kami bertemu, kami saling tukar informasi mengenai kehidupan saya di kota begitu pun sebaliknya.

Namun pertemuan kami tersebut diketahui oleh Camat Moro, T310, sehingga beliau menyuruh seseorang untuk memanggil saya dan saudari saya bernama Jacinta Marques untuk menghadap beliau di rumahnya. Setibanya di sana, kami diinterogasi, saat interogasi berlangsung saya dipukul dengan tangan di kepala, ditampar di pipi sebanyak 6 kali, dan ditendang dengan sepatu biasa pada bagian perut hingga saya terjatuh. Setelah itu Pak Camat menampar lagi adik saya Jacinta Marques. Setelah itu kami diberi arahan bahwa apabila di kemudian hari, kalau kami bertemu lagi dengan para Falintil, kami harus mengajak mereka supaya bisa menyerahkan diri ke kota. Setelah itu kami disuruh pulang ke rumah kami.⁴³⁶

400. Luis Maria da Silva (Maukiak) ditangkap sebulan setelah dia menyerahkan diri kepada Pasmar 9, karena kegiatannya dengan Fretilin di hutan telah diketahui:

[Setelah] satu bulan [saya menyerah] para ABRI mulai mengadakan operasi di Quelicai [Baucau] dan mencari orang-orang yang baru turun dari hutan yang pernah bekerjasama dengan para Fretilin. Pada akhirnya Pasmar 9 berhasil menangkap Raimundo. Raimundo diinterogasi...tentang siapa saja yang bergabung dengan Fretilin... [dan] mengaku bahwa saya juga terlibat dalam kegiatan Resistansi terhadap militer Indonesia.

Pada tanggal 2 Januari 1979, saya ditangkap oleh anggota Pasmar 9. Mereka membawa saya ke Pos Quelicai [Baucau] dan dihadapkan ke Komandan Pasmar 9 untuk diinterogasi mengenai apa yang saya lakukan. Setelah dua hari, saya dibebaskan.⁴³⁷

Menjebak mantan pemimpin Fretilin

Kesaksian José da Silva Amaral mengungkap suasana kecurigaan dan perpecahan dalam komunitas lokal di Timor-Leste pada masa itu. Siapapun yang mempunyai dendam dapat melaporkan musuhnya kepada komando militer setempat sebagai pendukung Resistansi dan orang tersebut akan terancam penahanan yang lama, penganiayaan, dan penyiksaan. Komisi mendengar banyak kasus tentang orang-orang yang dihukum sebelum dilakukan pemeriksaan, sebuah tindakan yang melanggar hak seseorang untuk pengadilan yang adil, termasuk asas praduga tak bersalah.

José Amaral seorang pemimpin Fretilin di Viqueque pada 1975. Setelah invasi, Amaral menjadi Asisten Komisaris Politik dan utusan Fretilin di Ossu (Viqueque). Pada akhir Oktober 1978, José Amaral dan sejumlah orang melarikan diri ke Gunung Matebian. Kemudian, mereka menyerah karena *base de apoio* (basis pendukung) dihancurkan dan banyak penduduk sipil tewas.

Sekitar Januari 1979, José Amaral bekerja sebagai petani di sawahnya di Desa Ossuroa (Ossu, Viqueque), tapi ia diketahui masyarakat sebagai mantan utusan Fretilin. Seorang komandan Hansip, Joaquim Monteiro, bekerja di sawah dekat dengan sawah José Amaral. Suatu malam orang mencuri semua sapi milik Joaquim Monteiro dan esok harinya Joaquim Monteiro menuduh José Amaral yang melakukan pencurian itu dan mengirim sapi-sapinya kepada Falintil. Amaral mengaku tidak bersalah dan yakin pencurian itu dilakukan oleh kepala desa setempat, atas perintah anggota Koramil Quelicai.

Beberapa hari kemudian tiga anggota Hansip T311, T312, dan T313 menangkap Amaral. Pertama mereka membawanya ke Koramil Viqueque dan kemudian ke sebuah rumah Portugis yang pada masa itu dipakai untuk Komando Taktis (Kotis). Batalion 202 menggunakannya sebagai asrama dan tempat untuk menginterogasi dan menyiksa tahanan. Seorang anggota Batalion 202 menginterogasi José Amaral mengenai penembakan terhadap tentara-tentara Batalion 202, yang mereka duga dilakukan oleh Fretilin. Anggota Batalion 202 itu menunjukkan lukanya kepada Amaral dan mengatakan: “Ini, ini! Siapa yang melakukannya?”

José Amaral mengatakan, “Bapak, saya tidak tahu. Bukan saya yang menembak Anda!” Kemudian tentara itu memerintahkan anggota Hansip T311 untuk menampar wajah Amaral, sampai dia terjatuh ke lantai. Tetapi interogasi tetap berlanjut. Setelah 15 menit, tiga orang tentara yang lain mulai memukul dia dengan ikat pinggang dan menendang mukanya.

Amaral dikembalikan ke markas Batalion 202. Jumlah orang yang ditahan di sana pada saat itu kira-kira sebanyak 50 orang. Amaral ditahan selama enam bulan antara Januari dan Juli 1979. Selama masa ini, interogasi berlanjut dan jika dia tidak menjawab sesuai dengan kemauan para militer, dia dipukuli dan ditendang hingga babak-belur oleh anggota-anggota Batalion 202. Pada Juli 1979, Amaral dibebaskan.⁴³⁸

401. Beberapa anggota Falintil yang tetap di hutan dan tidak menyerahkan diri, dikirim oleh komandan mereka untuk mengamati situasi di kota-kota. Beberapa orang ditangkap saat tiba di kota. João Amaral, saat itu anggota Falintil, menceritakan kepada Komisi mengenai pengalamannya, ketika dia dan temannya dikirim untuk memantau situasi Kota Suai, pada 1979 :

Ketika tiba di Suai, kami berdua ditangkap oleh tentara dari Batalion 507 di wilayah Ahinarae, Desa Debos [Suai, Covalima]. Jumlah anggota TNI yang menangkap kami berdua sekitar 100 orang. Setelah itu, kami berdua langsung dikurung di sebuah gedung (bekas toko orang Cina yang biasa disebut Cina Odamatan Tolu, yang artinya Toko Cina berpintu tiga) yang digunakan sebagai Markas TNI. Kami berdua ditahan di sana selama dua minggu. Sesudah dua minggu kami ditahan, TNI menyuruh teman saya Mali Raket untuk kembali ke hutan, dengan tujuan untuk memanggil dan membujuk teman-teman kami untuk turun dan menyerahkan diri kepada TNI di Suai. Namun setelah beberapa hari Mali Raket tidak pulang, sehingga saya dibawa oleh TNI dari Suai menuju ke Dili. Setibanya di sana saya dibawa ke Penjara Balide dan saya ditahan di penjara Balide selama

dua tahun. Selama dalam tahanan saya dipukul dengan kayu dan besi batangan dari ujung kaki hingga kepala, sampai babak belur. Akibat dari penyiksaan yang saya alami, sampai saat ini usus-usus perut saya masih sakit.⁴³⁹

Kesimpulan

402. Pada akhir 1979, militer Indonesia telah membangun sistem pengawasan terhadap masyarakat Timor-Leste yang berupa penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan bentuk-bentuk lain perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Pola-pola yang timbul dalam periode awal ini diulangi selama masa pendudukan. Pola tersebut meliputi:

- Menggunakan penahanan untuk membungkam lawan politik
- Menginterogasi siapapun yang dicurigai mempunyai hubungan dengan Fretilin/Falintil, termasuk hubungan keluarga untuk mendapatkan informasi tentang Resistansi
- Menggunakan penyiksaan dan tindakan kejam sebagai bagian tetap dari proses interogasi dengan bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam tertentu yang dipakai oleh tokoh-tokoh penguasa di seluruh wilayah
- Mengabaikan hak-hak atas proses pengadilan, termasuk menunjukkan surat penangkapan dan menjelaskan alasan penangkapan, memberi akses kepada pengacara, atau untuk hadir di pengadilan
- Menggunakan militer untuk melakukan penangkapan, bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan hukum dalam negeri Indonesia sendiri
- Menggunakan orang-orang Timor-Leste, termasuk militer, paramiliter, pertahanan sipil, dan pegawai negeri untuk melakukan atau dilibatkan dalam melakukan pelanggaran terhadap sesama orang Timor-Leste
- Membentuk sistem pengawasan komunitas di mana rumah tangga saling melaporkan.

Penahanan oleh penguasa pendudukan Indonesia, 1980 – 1984

Pendahuluan

403. Walaupun Indonesia telah menguasai sebagian besar wilayah dan penduduk pada akhir dekade 1970-an, Falintil tetap meneruskan serbuan dan serangan ke pos-pos militer. Jaringan klandestin menguat dan menjadi lebih teratur. Militer Indonesia menanggapi perlawanan ini dengan penahanan besar-besaran, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap penduduk sipil.^{*} Militer berupaya mengisolasi anggota Resistansi dari penduduk sipil dan memperlakukan tahanan politik dengan sangat kasar agar penduduk sipil menyadari bahwa hubungan dengan Resistansi akan membawa banyak penderitaan.⁴⁴⁰ Setelah gencatan senjata selama lima bulan berakhir pada 1983, ABRI melancarkan serangan militer besar-besaran.

404. Pola penahanan dan penyiksaan di awal dekade 1980-an sebagian besar mencerminkan peristiwa dan gejala tertentu, yaitu:

- Serangan Marabia, 1980
- Operasi Keamanan, Juni 1981
- Pemberontakan di Gunung Kablaki, 1982
- Penahanan selama Gencatan Senjata, Maret sampai Agustus 1983
- Kegagalan Gencatan Senjata, Agustus 1983
- Operasi Persatuan, Agustus 1983 hingga Juni 1984
- Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan pada 1984

Profil pelanggaran

405. Penahanan, penyiksaan dan penganiayaan terjadi selama periode tahun keempat ini, walaupun ada pengurangan kecil kalau dibandingkan dengan angka yang terdapat dalam fase utama invasi dan pendudukan wilayah Timor-Leste. Walau demikian, kejadian penahanan dan penyiksaan menaik selama periode ini dan memuncak sekitar 1983. Hal ini dapat diperhatikan dalam grafik-grafik di bawah ini. Pola penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan antara tahun 1980 dan 1984 secara pasti sangat berkaitan.[†]

^{*} Lihat Pedoman Militer No. JUKNIS/05/1/1982, yang menyebut penyerangan oleh GPK (Resistansi) sebagai 'ancaman dan gangguan' dan menjelaskan tindakan preventif untuk mencegah mereka. [Pedoman militer No. JUKNIS/05/1/1982, *System of Security in Towns and Resettlement Areas*, terjemahan dalam Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, Zed Books, London, 1984, hal. 184

[†] Koefisien korelasi antara penahanan dan penyiksaan yang dicatat adalah 0,65. Koefisien korelasi antara penahanan dan penganiayaan yang dicatat adalah 1,0.

Jumlah tindakan penahanan yang dilaporkan, 1980-1989



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah penyiksaan yang dilaporkan, 1980-1989



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah tindakan penganiayaan yang dilaporkan, 1980-1989



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

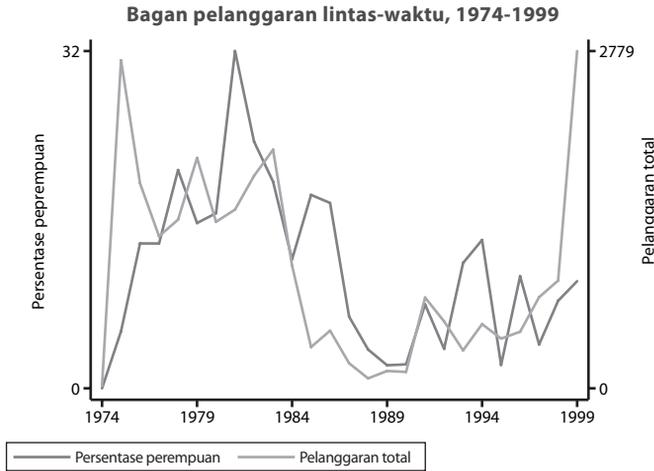
406. Puncak pelanggaran yang terjadi pada 1983 barangkali berhubungan dengan kegagalan Gencatan Senjata. Setelah kegagalan tersebut, Operasi Persatuan langsung dilancarkan, yaitu berupa upaya jelas dari pihak militer Indonesia untuk menemukan individu-individu yang diduga terlibat dengan pasukan Falintil.* Operasi Persatuan dipimpin oleh Kopassandha dan didukung kekuatan udara. Mungkin penyusunan kekuatan demikian ini didorong oleh adanya peran Hansip di dalam pemberontakan Viqueque yang mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap tentara Indonesia asal Timor-Leste (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

407. Wilayah-wilayah yang merupakan pusat kekerasan juga berpindah pada periode ini dari bagian barat, di mana tingkat kekerasan adalah paling tinggi pada tahun-tahun invasi, ke bagian timur dan tengah. Dari kasus yang dicatat terjadi dalam periode ini, 94,7% (7173/7574) dari kasus penahanan, 92,8% (2229/2403) dari kasus penyiksaan, dan 93,3% (1455/1560) dari kasus penganiayaan terjadi dalam wilayah timur dan tengah. Wilayah tersebut mencakup Dili dan Ataúro, di mana pusat penahanan terbesar diletakkan, dan wilayah timur, yang merupakan pusat Resistansi pada waktu itu. Sekitar separuh dari seluruh kasus penahanan dan penganiayaan terjadi di distrik Dili dan Lautém.†

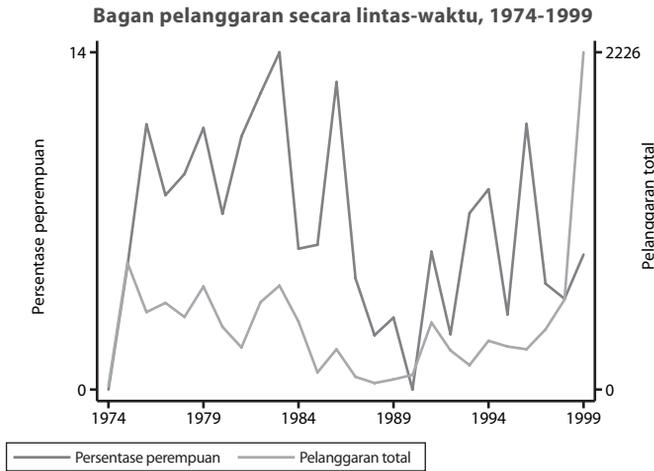
* Operasi Persatuan dilancarkan oleh Mayor Jenderal Benny Moerdani untuk menghabiskan Resistansi. Dalam suratnya kepada Komandan Xanana Gusmão pada Juni 1983, Moerdani menyatakan bahwa: "Tentara kami sudah siap menghancurkan kalian kalau kalian menolak kerjasama dengan Republik kami. Kami sudah menyediakan operasi—Operasi Persatuan—yang akan berlangsung pada Agustus." Dikutip dalam Budiardjo dan Liem, hal. 139 dan 47.

† Distrik Lautém melaporkan 23,7% (1797/7574) dari kasus penahanan; 23,3% (559/2403) dari kasus penyiksaan; dan 22,0% (343/1560) dari kasus penganiayaan. Distrik Dili melaporkan 27,3% (2066/7574) dari kasus penahanan; 13,4% (322/2403) dari kasus penyiksaan; dan 23,5% (366/1560) dari kasus penganiayaan.

408. Periode ini juga penting untuk dicatat karena dalam periode ini, perempuan menderita lebih banyak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan daripada biasanya bila dibandingkan dengan tahun-tahun lain. Antara 1980 dan 1984, 21,4% (1601/7574) dari kasus penahanan yang tercatat, 10,8% (259/2403) dari kasus penyiksaan yang tercatat, dan 18,7% (292/1560) dari kasus penganiayaan yang tercatat, diderita oleh kaum perempuan.* Kenaikan relatif dalam porsi korban penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang diderita oleh kaum perempuan dapat dilihat di bawah:

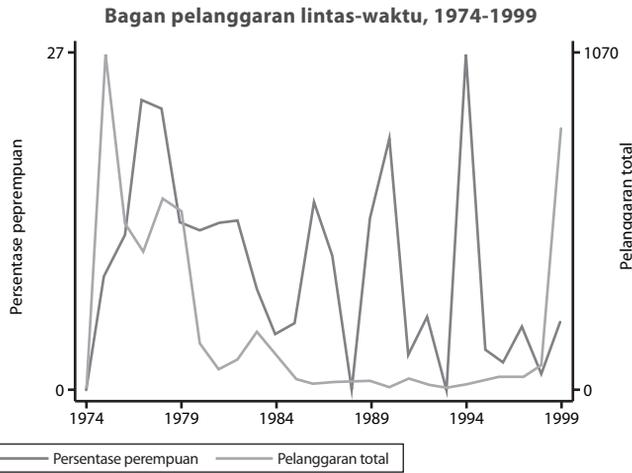


Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

* Selama periode mandat Komisi, 13,9% (3.512/25.383) dari kasus penahanan yang tercatat, 7,7% (857/11.135) dari kasus penyiksaan yang tercatat, dan 12,3% (1041/8433) dari kasus penganiayaan yang tercatat diderita oleh kaum perempuan.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

409. Hal ini sebagian dapat dijelaskan dengan adanya penangkapan dan pemindahan massal terhadap keluarga-keluarga, termasuk kaum perempuan, ke Ataúro. Kebanyakan korban menggambarkan pemindahan tersebut sebagai penahanan ketimbang pemindahan. Akan tetapi, kaum perempuan juga tampak menderita pelanggaran tersebut lebih tinggi daripada biasanya pada masa operasi militer skala besar, bila dibandingkan dengan waktu-waktu lain. Jelaslah bahwa pada masa operasi-operasi besarnya, militer Indonesia dan para pendukungnya tidak mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa orang-orang non-petempur (dan khususnya perempuan) terlindungi dari penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan.

410. Analisa terhadap para pelaku menunjukkan bahwa para anggota organisasi pertahanan sipil bertanggung jawab atas banyak kasus penahanan dan sebagian kasus penyiksaan dari periode ini. Selama tahun puncak penahanan pada 1983, Hansip disebutkan dalam 32,8% (644/1966) kasus penahanan. Kopassandha juga sangat aktif pada periode ini. Keterlibatan Kopassandha dalam kasus penahanan masyarakat sipil sewenang-wenang, hal yang terjadi sepanjang masa pendudukan, memuncak pada 1983. Pada tahun itu, 20,2% (398/1966) kasus penahanan dilaporkan berhubungan dengan Kopassandha. Hal ini adalah akibat Operasi Persatuan, yang merupakan reaksi dari pihak pasukan Indonesia setelah pemberontakan organisasi penahanan sipil.

Pemberontakan (*Levantamento*) Marabia, 10 Juni 1980

411. Gelombang besar pertama penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dalam periode 1980-1984 terjadi setelah para anggota kelompok Falintil dan klandestin menyerang stasiun penyiaran Marabia di Dare (di bukit sebelah selatan Dili) dan barak Yonif 744 di Becora (Dili bagian timur) pada 10 Juni 1980.

412. Militer dilaporkan terkejut dengan serangan tersebut dan membalas dengan melakukan penangkapan terhadap ratusan orang yang dicurigai, atau diketahui, sebagai pendukung kemerdekaan di Dili dan di distrik-distrik sekitarnya, untuk mencari pelaku.⁴⁴¹ Militer menahan individu yang dicurigai terlibat langsung dalam serangan,⁴⁴¹ anggota gerakan klandestin yang diharapkan bisa memberikan informasi,⁴⁴² dan ‘tersangka biasa’—yaitu individu-individu yang sudah sering ditahan karena hubungan mereka dengan kegiatan Resistansi di masa lalu.⁴⁴³

413. Penumpasan ini merupakan hasil kerjasama antara beberapa instansi di dalam militer Indonesia, termasuk anggota-anggota Kodim dan Koramil, Yonif 744, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat).⁴⁴⁴ Letnan T314 [orang Indonesia], kepala seksi intel Korem, memerintahkan dan kadang juga melaksanakan sendiri sebagian besar dari penangkapan ini. Anggota militer kadang didukung dan dibantu oleh anggota intelijen, Hansip, Brimob, Babinsa, atau kepala desa.⁴⁴⁵ Sebagai contoh, Maria Immaculada, seorang anggota organisasi yang memberikan dukungan logistik kepada Resistansi bersenjata, dipanggil ke rumah Kepala Desa T315 (orang Timor-Leste), yang kemudian mengidentifikasi Maria kepada Letnan T314. Letnan itu kemudian menangkap Maria dan membawanya ke Korem di Dili.⁴⁴⁶ Anggota dari Kodim Aileu juga menangkap sejumlah tersangka yang kemudian mereka serahkan ke pihak berwenang di Dili.⁴⁴⁷

Penahanan sewenang-wenang

414. Sifat gabungan dari usaha ini juga ditunjukkan dari variasi tempat para tahanan disekap. Pusat penahanan formal termasuk Korem di Dili dan Kodim Dili 1627, berbagai Koramil dan Penjara Comarca.⁴⁴⁸ Melanjutkan pola penahanan dari dekade 1970-an, tahanan sering dipindah-pindahkan dan dibawa ke pusat penahanan informal khusus untuk diinterogasi atau disiksa. Ini termasuk mes tentara Korem, rumah bersalin yang dikelola Persit (Persatuan Istri Tentara), yang bernama Kartika Candra Kirana (Kartika Sari)[†] di Colmera (Dili), dan markas besar SGI, juga di Colmera.⁴⁴⁹ Periode penahanan dalam pusat penahanan ini bervariasi dari satu hari sampai dua atau tiga minggu, setelah itu tahanan dibebaskan atau dipindahkan ke Comarca atau ke Pulau Atauro.

Penyiksaan dan penganiayaan

415. Perlakuan terhadap tahanan sangat kasar. David Dias Ximenes yang ditangkap setelah beberapa tahanan menyebut namanya sebagai otak penyerangan, dibawa ke Mes Korem. David disetrum, direndam di dalam tangki berisi air, dan melihat temannya sesama tahanan ditusuk sampai tewas di depan matanya. Orang yang menginterogasi mengancam bahwa dia akan mengalami nasib yang sama jika tidak bicara.⁴⁵⁰ José Gomes Guterres yang juga ditahan di Mes Korem, menggambarkan pengalamannya:

* Amnesty memperkirakan 400 penduduk sipil ditahan setelah serangan ini. Amnesty International, Laporan Tahunan 1981.

† Terkadang disebut Mandarin, nama lingkungan letak rumah bersalin ini.

Ada lima orang yang hadir selama saya diinterogasi: satu orang bertanya dan empat orang memukuli saya kalau jawaban tidak cukup jelas. Apakah jawabannya benar atau tidak, itu tidak ada pengaruhnya—jawabannya harus yang mereka mau dengar. Saya dipukul dengan popor senapan dan ditendang di sekujur tubuh. Kaki dan tangan saya diikat dan mereka mendorong saya ke dalam tangki air dan membenamkan saya selama dua menit. Kemudian mereka akan menanyai saya lagi. Kalau saya tidak mengaku proses tadi akan berulang. Mereka menaruh dua ekor lafaek rai maran [buaya darat] di badan saya, dan menarik ekornya agar mereka menggigit dan mencakar saya. Setelah satu bulan berada di Mes Korem, mereka memindahkan saya ke Penjara Comarca, di dalam sel pengasingan dan pada bulan September mereka mengirim saya ke Ataúro.⁴⁵¹

416. Maria de Fatima Pinto, yang bekerja di dalam Basis Organisasi Resistansi, bersama David Dias Ximenes dan Pedro Manek, kabur ke hutan setelah penyerangan. Dia memberitahu Komisi bahwa dia ditangkap setelah mantan anggota klandestin memberitahu penguasa tempat keberadaannya. Setelah tiga hari diinterogasi di Mes Korem, dia dipindah ke markas besar Korem selama satu bulan. Di sana dia ditelanjangi, dipukuli, disetrum, dibakar, kakinya ditindas dengan kursi, dan dia dibenamkan dalam air.⁴⁵²

417. Beberapa pernyataan menyebutkan penggunaan buaya darat selama penyiksaan dan di berbagai tempat penahanan.⁴⁵³ Agapito da Conceição Rocha melaporkan bahwa polisi, Hansip, dan ABRI menangkap dia di Aileu satu minggu setelah serangan Marabia. Dia ditahan di Kodim Aileu dan diinterogasi sebelum dikirim ke Dili. Agapito menuturkan kepada Komisi:

Saya dibawa dengan helikopter ke Lanud Dili lalu dibawa langsung ke Kotis [Komando Taktis] di Mandarin; di sana semua pakaian saya dilepas dan saya dimasukkan dalam bak air selama tiga hari dan tiga malam. Setelah itu para pelaku melepaskan buaya darat masuk ke dalam bak dan buaya itu menggigit telinga, wajah, bibir, dan kemaluan saya. Kemudian saya dikeluarkan dari dalam bak tersebut baru dipukul, ditendang, seterusnya dibawa masuk ke dalam ruang untuk menyanyikan lagu Foho Ramelau. Saya direkam oleh para pelaku. Saya ditahan di Mandarin selama dua minggu lebih.⁴⁵⁴

418. Amadeo da Silva Carvalho menggambarkan kepada Komisi bagaimana tentara Koramil Becora memaksa ayahnya, Luis Fatima Carvalho, duduk di atas pohon seperti kera selama satu hari penuh.⁴⁵⁵

419. Mereka yang ditahan setelah serangan Marabia disekap dalam kondisi yang sangat buruk. Di Kodim Dili, baik perempuan maupun laki-laki dipaksa telanjang.

Jika para tahanan ingin membuang air besar atau kecil, para tahanan baik laki-laki dan perempuan disuruh telanjang dan duduk saling berhadapan.⁴⁵⁶ Agapito Conceição Rocha menggambarkan kondisi sehari-hari di Comarca:

*Saya ditahan di Comarca Balide bersama 14 orang tahanan lain dalam sel yang ukuran kecil dan sempit. Dalam sel tersebut kami tidak bisa tidur hanya berdiri saja. Sehari makan satu kali dan minum air kotor dan akibatnya saya menderita sakit diare yang baunya membuat para tahanan lain tidak tahan.*⁴⁵⁷

420. Beberapa tahanan dipenjarakan di Comarca selama lebih daripada satu tahun tanpa informasi apapun tentang berapa lama mereka akan ditahan atau apakah keluarga mereka bisa mengunjungi.⁴⁵⁸

Penahanan dan penyiksaan Bernardino Ximenes Villanova

Bernadino Ximenes Villanova ditangkap, ditahan, dan disiksa setelah serangan Resistansi terhadap stasiun penyiaran Marabia dekat Dili pada 1980. Komisi mewawancarai Bernadino dan ia juga telah bersaksi di Audiensi Publik CAVR tentang Penahanan Politik:

Pada tanggal 10 Juni 1980 kami pergi ke Marabia. Tujuan kami untuk bertemu dengan delegasi yang [kami dengar akan] tiba di Timor dan untuk membuktikan ke dunia bahwa Fretilin masih ada. Kami juga memutuskan untuk menyerang stasiun penyiaran di Marabia. Pada jam 2 pagi kami mulai menyerang. Beberapa orang terbunuh dalam pertempuran, yang berlangsung sampai jam 10 pagi. Kemudian beberapa orang, termasuk saya, menyerah dan militer Indonesia membawa kami pergi.

Kami dibawa ke Koramil Becora, terus dipindahkan dan ditahan di Kodim. Malam itu kami dibawa ke Comarca dan esoknya mereka melepas kita dan berkata: "Siapa yang dekat api akan merasa panas; siapa yang jauh, tidak." Saya tinggal dengan Pastor Alberto [Ricardo] di Becora setelah itu, menjadi sopirnya. Saat saya tiba di rumahnya, dua orang Hansip yang tidak saya kenal datang menangkap saya saat saya baru mau mengantar seorang suster dan seorang dokter ke Farol. Sebelum mereka sempat membawa saya pergi saya bilang saya tidak akan lari dan setelah mengantar ke Farol saya akan jalan menuju Koramil Becora. Tetapi Pastor Ricardo mengikuti saya dengan taksi dan membawa saya ke kediaman Uskup Dom Martinho di Lecidere.

Jam 6 pagi tanggal 12 Juni 1980 Letnan T314, petugas intel Korem, sopirnya, dan seorang lain datang ke rumah uskup dan menangkap saya.

Mereka membawa saya ke mes Korem. Ketika sampai di tangga seorang ABRI bernama T316 menyapa saya dengan meninju, menendang, dan memukul saya. Di dalam, ABRI menginterogasi saya tentang peristiwa masa lalu dan tentang kerja saya di Gereja. Mereka ingin tahu persisnya siapa yang terlibat dalam penyerangan di Marabia dan hubungan antara pekerjaan saya di Gereja dengan penyerangan. Karena saya menolak memberi informasi, tentara menutup wajah mereka dengan kain hitam seperti ninja agar saya tidak kenal siapa yang memukuli saya. Mereka meninju dan menendang saya dan menyundut saya dengan rokok dan korek. Terus mereka memukul saya dengan senjata sampai saya pingsan.

Saat saya sadar, mereka mendudukkan saya di kursi lagi dan menyuruh saya meletakkan ibujari kaki di bawah kaki meja. Awalnya hanya saya yang duduk di kursi tetapi setelah itu Letnan T314 duduk di kursi, menindih kaki saya. Terus seorang tentara yang tidak saya kenal menendang saya dari belakang sampai saya jatuh. Kedua ibujari kaki saya pecah tetapi mereka terus memukul saya sampai saya tidak tahan dan saya katakan nama wakil komandan, Luis Silva, mantan kepala desa Hera [Dili]. ABRI langsung pergi dan menangkap Luis Silva dan pada jam 12 siang membawa kami berdua. Kami duduk berdua di meja dan mereka menginterogasi kami dan juga memukul kami dengan pipa besi sampai berdarah. Saya memakai salib di leher dan mereka menarik lepas dan membuangnya. Interogasi dan pemukulan mulai jam 12 siang dan berlangsung sampai tengah malam.

Pada tanggal 13 Juni mereka mencoba memancing saya untuk menceritakan keterlibatan Gereja. Saya menolak mengatakan apapun. Mereka mulai menyetrum saya dan menyundut saya dengan rokok dan terus menanyakan keterlibatan Pastor Ricardo. Saya hanya bilang saya tidak tahu apa-apa lagi. Mereka memasukkan saya kembali ke ruangan itu jam 9 malam. Jam 9 pagi harinya, mereka memasukkan saya ke sebuah tangki dan lalu memasukkan buaya darat dengan saya. Mereka memukul-mukul buaya sampai buaya itu menggigit wajah saya dan menyobek kulit saya. Lalu mereka menaruh ember di kepala saya dan bertanya "Apa Gereja juga terlibat?" Kalau saya tidak jawab, mereka memukul sekeliling kepala saya dengan pipa besi. Habis itu saya dibawa kembali ke kamar dan disekap selama satu minggu.

Sementara itu, ABRI menangkap orang lain, José Soares, seorang tokoh masyarakat di Bidau (Dili). Dia dipukuli dan selama pemukulan ini dia tidak diam. Dia bilang saya pemimpin penyerangan itu. Saya dihadapkan dengan José Soares. Tentara di sana menyuruh dia meninju saya tiga kali dan saya jatuh ke lantai. Lalu militer menyuruh saya memukul José Soares tiga kali. Dia tidak jatuh. Saya dikirim kembali ke kamar dan José Soares dilepaskan. Satu hari kemudian saya dimasukkan ke sel sampai tanggal 28 Juli.

Pada tanggal 29 Juli militer membawa saya keluar lagi. Mereka melepas pakaian saya dan memasukkan saya ke tangki, kali ini dengan seorang Timor-Leste lain. Saya tidak kenal dia dan saya tidak tahu kenapa dia dimasukkan ke tangki dengan saya. Kami diikat dan mereka mengikat alat kelamin kami berdua. Lalu mereka mulai memukul orang itu. Ini membuat tali yang mengikat alat kelamin kami meregang dan saya kesakitan. Saya harus duduk sebelah orang itu menunggu sampai dia bangun karena kami masih diikat bersama. Setelah itu, saat panas-panasnya, kami diikat bersama lagi dan diletakkan di atas batu di tempat yang paling terik di Korem dan dibiarkan di sana selama satu jam sebelum mereka membawa kami masuk kembali.

Pada tanggal 30 Juli mereka membawa saya ke Comarca di Balide dan memasukkan saya ke salah satu sel gelap dari baja, yang terkenal karena orang-orang yang meninggal di sana. Kami disekap di sana selama 10 hari dan saya tidak bisa membedakan siang dan malam.⁴⁵⁹

Pemindahan tahanan politik ke Pulau Ataúro

421. Banyak orang yang ditangkap setelah serangan Marabia dikirim ke Ataúro. Ini merupakan gelombang tahanan politik pertama yang dikirim ke pulau tersebut; sebagian tiba pada Juli dan selebihnya pada September 1980. Yang lain dikirim pada periode empat tahun setelahnya. Bentuk penahanan ini tidak hanya menghukum mereka yang terlibat dalam serangan saja, tapi juga memecah belah jaringan klandestinitas dengan memisahkan anggota aktif dari jaringan pendukung dan keluarganya.^{*}

422. Setelah serangan Marabia, Amnesty International mencatat bahwa 120 orang telah dikirim ke Ataúro,⁴⁶⁰ sedangkan angka-angka yang dikumpulkan oleh Komisi sendiri menunjukkan bahwa jumlah orang yang ditahan di Ataúro pada pertengahan tahun 1980 adalah sekitar 500 orang. Sebagian tahanan dikirim dengan helikopter tetapi sebagian besar dikirim dengan kapal laut dalam kelompok-kelompok besar.[†] Bernardino Vilanova dan Agapito da Conceição Rocha dikirim dengan kapal laut pada 3 September. Bernardino bercerita:

Kami dibawa dari Comarca pada tanggal 3 September ke pantai menunggu kapal kecil. Pada jam 3 pagi saya diangkat dengan kapal itu ke Pulau Ataúro. Tiba di sana orang-orang menyiapkan tempat di

^{*} Pedoman militer Korem dalam hal bagaimana memecah-belah jaringan pendukung GPK menyarankan pemindahan ke Ataúro seluruh anggota jaringan pendukung dan keluarga "GPK" yang belum dikirim: "Dengan cara ini kita bisa memutus ikatan antara jaringan pendukung di pemukiman dan Nurep [Kader Perlawanan]." Korem 164, Seksi Intelijen, Pedoman Petunjukan: "Cara untuk Babinsa atau Tim Pembina Desa untuk membongkar jaringan pendukung GPK", 30 Agustus 1982, dalam Budiardjo dan Liem, hal. 180.

[†] Contohnya, José Carvalho menggambarkan bagaimana bapak mertuanya, Abilio de Sousa, dan satu orang lagi, Felisberto da Conceição ditangkap dan langsung diterbangkan ke Ataúro setelah serangan Marabia. Pernyataan HRVD 2165.

sebuah rumah di Ataúro. Kami diberi dua kaleng jagung. Sebagian besar jagung sudah busuk tetapi kami harus makan. Di Ataúro kami hidup bebas tetapi tidak bisa menghubungi keluarga di Dili. Kami menahan ini sampai kami dibebaskan pada tahun 1984.⁴⁶¹

423. Guilherme da Costa (Bie Ki Ruby), seorang komandan Fretilin, juga dikirim ke Ataúro setelah serangan Marabia. Dia ditahan pada 2 Desember 1980, kira-kira enam bulan setelah serangan itu, di Ostico (Vemasse, Baucau) karena telah disebut oleh seorang anggota Fretilin/Falintil saat interogasi. Guilherme ditahan selama tiga minggu di RTP 12 di Baucau, dua minggu di Hotel Flamboyan di Baucau, satu minggu di Komando Strategis (Kotis) di Venilale (Baucau), dua minggu di markas besar SGI di Colmera (Dili), dan lebih daripada satu bulan di Penjara Comarca. Selama di Comarca, Guilherme diinterogasi dan disiksa. Akhirnya dia dikirim ke Ataúro. Istri dan anak Guilherme juga ditangkap di Ostico tidak lama setelah dia ditangkap dan dikirim langsung ke Ataúro dengan kapal laut dari Baucau. Setelah sampai di Ataúro, mereka bertemu Guilherme dan keluarga itu menghabiskan waktu dua setengah tahun di pulau tersebut.

424. Guilherme menerangkan bahwa pada 1983 beberapa tahanan dipulangkan tetapi penguasa memutuskan bahwa Guilherme dan 700 tahanan lainnya, sebagian besar dari Bucoli, Vemasse, Venilalu, Utau-Lari, Uato Carbau, dan Manatuto (wilayah timur) masih bisa menjadi ancaman jika dibebaskan. Orang-orang ini ditempatkan di Cailaco (Bobonaro, wilayah barat). Di Cailaco keluarga itu tinggal di gubuk sementara beratapkan seng dan ber dinding kanvas. Setiap pagi dan malam mereka harus antre dan dihitung. Siang hari mereka diizinkan pergi dan mencari makanan, tapi mereka tidak boleh pergi malam hari. Mereka juga dipaksa kerja, melakukan hal seperti membangun jalan, membangun gedung sekolah, dan lapangan sepak bola serta melakukan kegiatan kebersihan. Para anggota Hansip, Babinsa, dan Binpolda menjaga mereka.

425. Guilherme da Costa dan keluarga menghabiskan empat setengah tahun di Cailaco sebelum mereka boleh pulang. Dalam apel umum, para tahanan diberitahu bahwa Timor-Leste telah menjadi tempat yang aman, karena tinggal 50 orang anggota Resistansi yang tersisa di seluruh Timor. Sebagian besar dari mereka pulang ke daerah asal, tapi Guilherme da Costa tinggal sampai 1994 untuk meneruskan kegiatan klandestin telah ia ikuti di sekitar Cailaco.⁴⁶²

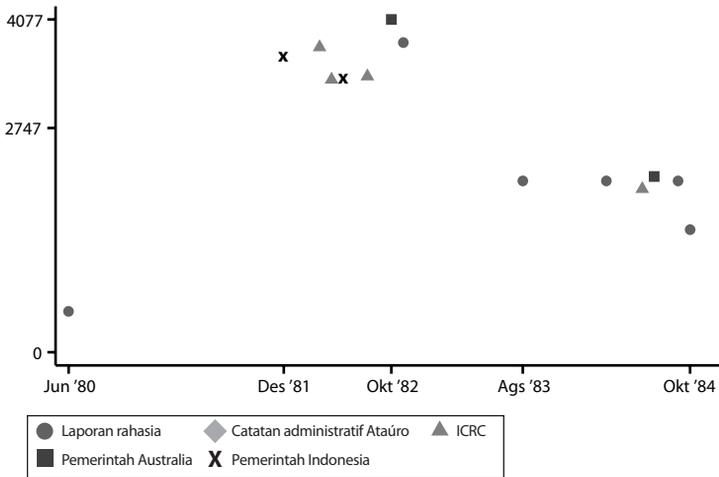
Ataúro

Ataúro, pulau gersang di lepas pantai utara Dili, pada 1937 untuk pertama kali dipakai Portugis untuk mengasingkan para tahanan politik dari Portugal dan koloni Portugis. Menurut Vasco Lopes da Silva, mantan kepala desa Vila (Ataúro, Dili), para tahanan yang terkenal antara lain adalah ayah dari Manuel Carrascalão dan Mário Lopes, ayah dari Maria do Ceu Lopes da Silva Federer, yang diasingkan

dari São Tome. Dalam waktu satu tahun, 1959, pemerintah Portugis mengirim lebih daripada 3.000 orang ke Ataúro. Selama Konflik Bersenjata Internal 1975, gubernur Timor Portugis dan para pejabat pemerintah Portugis yang lain lari dari Dili ke Ataúro dan kemudian ke Darwin. Mereka akhirnya dijemput kapal yang membawa mereka ke Makau dan Lisabon (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).⁴⁶³

Indonesia menggunakan Ataúro sebagai tempat penahanan sewenang-wenang orang Timor-Leste antara 1980 dan 1986, sedangkan jumlah tahanan memuncak pada 1982 dengan sekitar 4.000 tahanan. Hal ini sesuai dengan informasi yang dikumpulkan oleh Komisi secara langsung melalui proses pengambilan pernyataannya dan dalam laporan-laporan sumber sekunder Amnesty International; kedua data tersebut membenarkan bahwa sejumlah besar orang ditahan di Pulau Ataúro pada awal tahun 1980-an. Angka-angka tahanan dapat dilihat di bawah.*

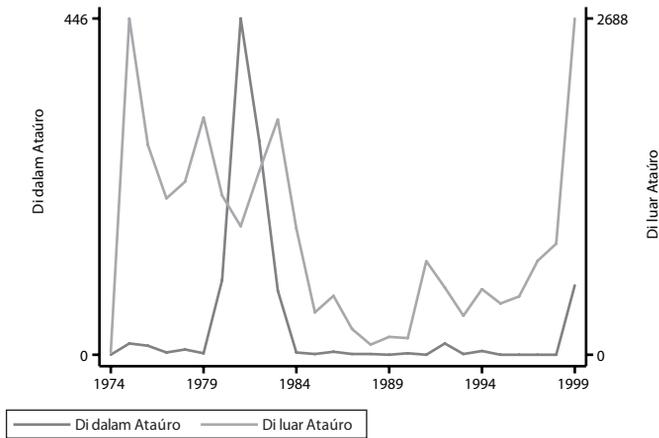
Bagan jumlah orang yang ditahan di Ataúro, Juni 1980 - Oktober 1984



Referensi: Amnesty International, *East Timor: Violations of Human Rights (1985)*

* Komisi telah menerima bukti dari beberapa macam sumber mengenai jumlah orang yang ditahan di Ataúro pada masa-masa berbeda. Sebagian sumber memperkirakan angka yang jauh lebih tinggi dari 4.000 dan kalau dihitung semua orang yang pernah dipindah ke Ataúro antara 1980 dan 1984, jumlah kumulatif bisa lebih daripada 6.000. Ceu Lopes Federer memberitahu kepada Komisi bahwa dia menyimpan daftar nama para tahanan pada masa dia bekerja sukarela dengan ICRC yang berisi 6.000 nama. [Kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik mengenai Penahanan Politik, 17-18 Februari 2003.]

Bagan jumlah penahanan yang dilaporkan, di dalam dan di luar Ataúro



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Pulau ini dipakai untuk menahan para tahanan politik dan penduduk sipil biasa, termasuk anak-anak dan mereka yang berusia lanjut yang kerabatnya dalam Resistansi. Para tahanan dikirim ke pulau ini dalam kelompok-kelompok besar, kelompok pertama berangkat pada Juli 1980 setelah serangan Marabia. Sebagian besar orang dikirim ke Ataúro dengan kapal, walau ada juga yang dikirim dengan helikopter. Hanya sedikit yang diberitahu ke mana mereka hendak dibawa hingga keberangkatan mereka. Pada saat tiba di pulau ini, para tahanan berjajar, dihitung, dan dicatat.⁴⁶⁴ Pihak otoritas kemudian menunjuk orang-orang tertentu (para kepala rukun tetangga) untuk mewakili satu kelompok tahanan yakni yang sering berasal dari desa yang sama. Orang-orang yang ditunjuk ini bertanggung jawab atas perilaku orang-orang dalam kelompok mereka.⁴⁶⁵

Meskipun orang-orang yang dikirim ke Ataúro adalah tahanan dalam arti mereka tidak dapat meninggalkan pulau ini, mereka tidaklah ditahan di dalam bangunan penjara. Kelompok tahanan yang pertama ditempatkan di dalam bangunan sekolah dasar di kota utama Vila.⁴⁶⁶ Kemudian rumah-rumah sementara yang dihuni oleh 20-40 keluarga, dibangun di dekat Vila baik oleh pihak otoritas Ataúro atau oleh para tahanan sendiri. Rumah-rumah tersebut beratap seng dan berdinding plastik hitam atau kain terpal. Mereka tidak memiliki tempat tidur atau air ledeng.⁴⁶⁷

Pada awalnya kondisi kehidupan sangatlah menyedihkan. Pihak militer membagikan jagung busuk yang jumlahnya tak memadai.⁴⁶⁸ Ceu Lopes Federer, mantan sukarelawan ICRC di Ataúro, berkata

bahwa ketika penduduk meminta makanan lagi, pihak militer mengirimkan helikopter bermuatan makanan tetapi tetap saja tidak pernah cukup. Banyak yang menderita malnutrisi dan kelaparan. Orang-orang makan daun pepohonan,⁴⁶⁹ ganggang laut, dan kadang-kadang mencuri hasil kebun penduduk setempat untuk bertahan hidup.⁴⁷⁰ Jarang terdapat air bersih.⁴⁷¹ Beberapa orang, termasuk anak-anak dan orang tua, dipaksa bekerja di bawah penjagaan polisi atau Hansip untuk mendapatkan makanan atau sedikit upah.⁴⁷² Beberapa tahanan datang hanya dengan pakaian yang mereka pakai saja karena mereka dipaksa meninggalkan barang milik mereka.⁴⁷³ Penduduk setempat memberi mereka makanan dan pakaian tetapi tetap saja banyak yang mati kelaparan, khususnya anak-anak dan orang tua.⁴⁷⁴ Bantuan dari ICRC mulai Februari 1982, sangat memperbaiki kondisi kehidupan sehari-hari, dengan memberi mereka obat-obatan, beras, susu, ikan sarden, kacang hijau, teh dan gula, makanan kaleng, dan bahan makanan lain.⁴⁷⁵ Seorang dokter juga mengunjungi pulau ini untuk merawat orang yang sakit.

Para anggota Koramil, polisi, dan Hansip setempat ditugaskan menjaga para tahanan di Ataúro. Kadang-kadang para tahanan diizinkan keluar dari Vila untuk mencari makanan, tetapi mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin bepergian dari Koramil ke manapun mereka akan pergi ke luar kamp dan harus melapor kembali kepada Koramil saat mereka kembali.⁴⁷⁶ Mereka yang melanggar aturan ini akan dihukum habis-habisan.⁴⁷⁷ Namun Ceu Lopes Federer menjelaskan bahwa aturan tentang izin bepergian lebih ketat diterapkan selama seorang tahanan menjalani tiga bulan pertamanya di pulau ini dan kemudian diterapkan secara lebih longgar sehingga orang-orang dapat pergi lebih jauh lagi dari kota utama tanpa izin. Hal serupa terjadi pada jam malam yang ditetapkan oleh Koramil. Semula jam malam ditetapkan pukul 18.00 lalu diperpanjang menjadi pukul 20.00, kemudian diperpanjang lagi menjadi pukul 22.00.⁴⁷⁸ Para tahanan kemudian dapat menyelenggarakan hiburan, seperti menari *tebe licurai* dan *tebe dahur* (jenis-jenis tarian tradisional) dalam periode ini.⁴⁷⁹

Para anggota keluarga tidak diizinkan mengunjungi para tahanan dan sebagian besar para tahanan tidak punya cara memberitahukan keberadaan mereka kepada orang-orang tercinta mereka. Sejak 1982,* ICRC mulai mencatat nama-nama tahanan dan desa asal mereka, kemudian menghubungi keluarga mereka.⁴⁸⁰ Contohnya, Maria Fatima da Costa dari Same memberitahu Komisi bahwa enam bulan setelah suaminya menghilang, ICRC datang memberitahu dia

* Para saksi pernah melapor kepada Komisi bahwa kunjungan ICRC mulai pada 1981, namun Laporan Tahunan ICRC menunjukkan bahwa kunjungan pertama dilakukan pada awal 1982.

bahwa suaminya berada di Ataúro. Maria dapat mengirimkan surat kepada suaminya melalui ICRC.⁴⁸¹

Meskipun sebagian besar tahanan Ataúro tidak diinterogasi sesampainya mereka di pulau ini, beberapa interogasi masih dilakukan. Guilherme da Costa menggambarkan bagaimana, biasanya dalam tiga bulan pertama kedatangan mereka, orang-orang tertentu dipanggil ke Koramil atau kantor polisi dan diinterogasi. Interogasi tersebut dilaksanakan antara lain oleh Letnan Satu T317 dan Letnan Dua T318 (keduanya orang Indonesia) dari Pasmr (Pasukan Marinir).⁴⁸²

Mulai 1983 pihak otoritas mulai mengirim orang-orang pulang atau ke tempat-tempat lain di Timor-Leste. Orang-orang yang ditangkap dan dikirim ke Ataúro sehubungan dengan kasus Mau Chiga pertamanya dikirim ke Bonuk (Hato Udo, Ainaro) selama beberapa minggu sebelum diizinkan pulang. Sejumlah besar orang yang diyakini masih menjadi ancaman, dikirim ke Cailaco (Bobonaro).

Menurut Ceu Lopes Federer, dibandingkan dengan kondisi para tahanan di penjara-penjara Dili, keadaan mereka jauh lebih baik karena mereka tidak dipukuli setiap hari. Namun, mereka hidup dalam kondisi yang buruk, jauh dari rumah, dan banyak yang mati karena kelaparan atau terkena penyakit. Adelina Soares berkata tempat ini seperti penjara. Pulau ini terisolasi. Beberapa orang mencoba melarikan diri tetapi gagal. Dia menggambarkan kehidupan mereka di Ataúro yang kekurangan makanan, kelaparan, sakit, kehilangan hubungan dengan keluarga, mengalami depresi mental dan trauma.⁴⁸³ (Untuk penjelasan lebih terperinci tentang kondisi di Ataúro lihat Bab 7.3: Pemandahan paksa dan kelaparan.)

Operasi Keamanan 1981

426. Operasi Keamanan adalah tanggapan terhadap pemberontakan dan bangkitnya Fretilin/Falintil pada awal 1981. Operasi ini diluncurkan pada Juni 1981 untuk memberantas Resistansi dari perdesaan dan mematahkan jaringan klandestin yang memungkinkan kelangsungan hidup Falintil di hutan.[†] Walaupun operasi ini paling

* Pada Konferensi Nasional Fretilin/Falintil Maret 1981, Xanana Gusmão terpilih sebagai kepala Dewan Revolusioner Perlawanan Nasional (*Concelho Revolucionário da Resistência Nacional*, CRRN) yang baru terbentuk, serta Panglima Tertinggi Falintil. Di bawah kepemimpinannya, Fretilin/Falintil mulai mengandalkan jaringan klandestin, khususnya karena *base de apoio* (basis pendukung) tidak lagi beroperasi. Falintil juga mulai bergerak secara lebih lokal, dengan menggunakan satuan lebih kecil untuk menyerang sasaran Indonesia (lihat Bagian 5: Resistansi: Struktur dan strategi).

† Pasmr 11 beroperasi di Timor antara 1 April dan 24 November 1981 untuk membantu ABRI melaksanakan Operasi Keamanan. Kegiatan antigeryla mereka termasuk: menengarai daerah pemukiman sipil yang dicurigai bersimpati dengan Resistansi, penghancuran jaringan mata-mata melalui interogasi tahanan dan dari dokumen yang berhasil ditemukan, mematahkan hubungan antara pasukan Resistansi dan keluarga mereka dengan mengirim keluarga mereka ke Ataúro.

dikenal dengan pelaksanaan operasi pagar betisnya (kadang disebut operasi kiki) dalam skala besar di seluruh wilayah untuk memaksa keluar pejuang Falintil, operasi ini juga melibatkan penahanan dan pemindahan ke Ataúro banyak penduduk sipil yang punya hubungan dengan Resistansi.^{*} Analisa kuantitatif Komisi menunjukkan kenaikan yang jelas angka penahanan di Ataúro mulai Juni 1981, dengan puncaknya pada Agustus, saat Operasi Keamanan berada di titik puncaknya.

427. Mário (Marito) Nicolau dos Reis menggambarkan aspek ini dari operasi sebagai berikut:

Militer mulai sadar bahwa para gerilyawan terus mendapat dukungan penduduk. Ini jelas lewat terus mengalirnya bantuan logistik, pakaian, amunisi, dan lainnya...perlengkapan untuk para gerilyawan. Mereka [militer Indonesia] mulai membuat rencana bahwa setiap orang yang masih memiliki keluarga di hutan akan diasingkan ke Ataúro. Ini termasuk kami, yang mengurus organisasi klandestin.⁴⁸⁴

428. Komisi menganggap sebagian dari kasus pemindahan massal penduduk sipil ke Ataúro sebagai pemindahan paksa, dan kasus-kasus ini dibahas dalam Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan. Ini adalah kasus-kasus di mana individu tidak melakukan "kesalahan" apapun, tetapi dipindah ke pulau tersebut karena memiliki hubungan saudara dengan seseorang yang masih di hutan (jadi dianggap sebagai Fretilin/Falintil), atau mereka berasal dari wilayah tempat Fretilin aktif. Pernyataan yang diterima Komisi menginformasikan bahwa tahanan seperti ini biasanya tidak diinterogasi atau ditahan di tempat-tempat lain sebelum dikirim ke Pulau Ataúro, dan dengan demikian tidak melaporkan penganiayaan atau siksaan. Penduduk sipil di timur Timor-Leste, di mana Fretilin/Falintil sangat aktif, secara khusus rentan terhadap tindakan pemindahan paksa ke Ataúro.[†] Dalam satu kasus pada Juli 1981 sebuah kelompok terdiri atas 300 orang keluarga anggota Fretilin/Falintil dari Distrik Baucau disuruh berkumpul oleh kepala desa mereka. Militer kemudian mengirim mereka dengan kapal laut ke Ataúro.[‡]

* Lihat 2.11: Operasi Keamanan; Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.7: Pelanggaran hukum perang; dan Bab 7.8: Pelanggaran hak anak, untuk informasi lebih lanjut tentang aspek Operasi Keamanan ini.

† Pernyataan HRVD yang menunjukkan penangkapan sewenang-wenang di daerah timur Timor-Leste: 7786; 7096; 3959; 7608; 4367; 5383; 0206; 4383; 5346; 8759; 8795; 3052; 6081; 6145; dan 8744. Menurut Ernest Chamberlain, 24 keluarga dari Iliomar (Lautém) dibuang ke Ataúro pada 1981, semuanya memiliki saudara Falintil di hutan. Sebagian besar diasingkan selama 15 bulan, setelah itu sebagian dipindah ke Maliana selama empat tahun berikutnya, sebelum kembali ke Iliomar pada 1986. [Ernest Chamberlain, *The Struggle in Iliomar, resistance in rural East Timor*, Point Lonsdale, Australia, 2003, hal. 25.]

‡ Contohnya, Ricardina Ximenes memberitahu Komisi bahwa pada 12 Juni 1981 kepala desa Tequinomata (Laga, Baucau), T319, memberitahu dia bahwa Ricardina harus berkemas dan pergi ke Ataúro karena seorang anggota keluarga, Teotónio, masih berada di hutan. T319 menyuruh Ricardina, dua anaknya, suami, ibu, dan seorang lagi anggota keluarganya untuk berkumpul di kantor Babinsa bersama penduduk Tequinomata lainnya. Kelompok ini kemudian diangkut dengan truk ke pelabuhan Laga untuk berangkat ke Ataúro. [Pernyataan HRVD 7786.]

429. Tetapi pada kasus-kasus lain Komisi menganggap pemindahan tahanan politik ke Atauro selama Operasi Keamanan sebagai bentuk penahanan sewenang-wenang. Para korban dipindahkan karena mereka telah melakukan kegiatan Resistansi apapun mulai dari memberi makanan ke keluarga anggota yang masih bersembunyi, sampai keterlibatan di salah satu struktur yang dibentuk untuk mendukung Resistansi bersenjata yang dikenal dengan nama Kelompok Inti Resistansi Populer (Nucleo Resistência Popular, Nurep).⁴⁸⁵ Komisi juga menerima laporan tentang laki-laki yang ditangkap karena menolak bergabung dengan Operasi Kikis atau saat mereka kembali dari operasi tersebut.⁴⁸⁶ Kasus-kasus ini termasuk:

- Celestino Verdial menceritakan tentang penahanannya di Ainaro pertengahan September 1981 setelah kembali dari suatu Operasi Kikis. Operasi ini tidak berhasil menangkap Xanana ataupun Venancio Ferraz, dan komando militer setempat mulai mencurigai dia menyembunyikan pemimpin Falintil. Seorang anggota militer menangkap dia dan membawanya ke Koramil Hato Udo (Ainaro) kemudian ke Kodim Ainaro di mana dia diinterogasi, dipukul, dan diancam akan dibunuh jika tidak mengaku kalau dia memberi makanan ke Venancio Ferraz. Kemudian dia menghabiskan waktu satu minggu di Koramil. Lalu dia dikirim ke barak tentara di Taibessi (Dili). Celestino mengatakan bahwa dia dikirim dengan helikopter ke Atauro bersama 11 orang lainnya pada 1981.⁴⁸⁷
- Aquiles da Costa ditangkap bersama lima pamannya (Armando Soares, Jacinto Soares, Cipriano Soares, Pedro Soares, dan Izidio Soares) di Vemasse (Vemasse, Baucau) pada 1 Oktober 1981 karena dicurigai memberikan delapan karung beras dan satu kerbau kepada Falintil. Kemudian dua perwira intel ABRI melakukan penangkapan dan membawa para tahanan ke pos ABRI di Laga. Paman Aquiles da Costa dipukuli dengan pentungan besi, kemudian keenam tahanan diikat dan dibenamkan dalam air. Mereka ditahan selama dua hari di Laga sebelum dikirim dengan kapal laut ke Dili, lalu ke Atauro selama lima tahun.⁴⁸⁸
- Fernando da Costa Lopes dari Haurobo (Baucau) menggambarkan bagaimana ayahnya, José Lopes, dijemput dan dikirim ke Atauro pada akhir 1981. Sebelumnya dia pernah ditangkap dua kali karena memberikan barang-barang kepada Falintil. Seseorang bernama T320 [seorang pejabat Timor-Leste dari kantor desa] menyekap José Lopes selama satu hari dan memukulinya.⁴⁸⁹
- Domingos Madeira dicurigai sebagai mata-mata Falintil dan terlibat serangan Falintil di Hariana (Uato Haco, Baucau). Pada 15 Juni 1981 dia ditangkap oleh Komandan Hansip T321, dua anggota Hansip bernama T322 dan T323, dan seorang anggota ABRI. Pelaku penangkapan kemudian membawa dia ke Koramil Venilale di mana dia diinterogasi oleh anggota DPRD Baucau T324 (seorang Timor-Leste) dan Komandan Hansip T325 serta Komandan T326. Selama interogasi, mereka memukul dia dengan popor senjata serta menendang dan meninju dia. Dia bilang dia dipukuli secara rutin sampai Agustus 1981, saat dia dikirim ke Comarca selama beberapa hari sebelum dikirim ke Atauro selama dua tahun.⁴⁹⁰

430. Sebagian besar orang yang ditangkap selama Operasi Keamanan berasal dari wilayah timur.⁴⁹¹ Hal ini sesuai dengan informasi dari sumber sekunder, yang menunjukkan bahwa ‘operasi penyisiran’ terpusat di wilayah timur dan bahwa “Hotel Flamboyan di Baucau adalah pusat komando militer pada 1981 untuk operasi [pagar betis]”.

431. Beberapa penangkapan juga dilakukan di wilayah tengah dan barat selama Operasi Keamanan, tetapi strategi penangkapan kelompok besar anggota keluarga dan memindahkan mereka ke Atauro tidak dilakukan secara luas di sini. Bilamana hal itu dilakukan, anggota keluarga sering ditahan dan diinterogasi sebelum dikirim ke pulau. Sebagai contoh, seorang wanita Timor-Leste memberitahu Komisi bahwa pada 1981 kepala Desa Rotuto (Same, Manufahi), T327, dan seorang Timor-Leste lain yang disebut T328, keduanya bertindak atas perintah ABRI, memaksa dia menjadi bagian dari rencana untuk memaksa suaminya untuk keluar hutan:

Kepala Desa T327 memberi saya beberapa surat untuk meyakinkan suami saya dan anggota Falintil lainnya untuk menyerah. Saat itu saya punya bayi kecil tetapi saya tidak bisa merawat [anak saya] karena saya harus membawa surat ke hutan dan menempel surat-surat itu di pohon supaya suami saya...dan anggota Falintil lainnya bisa melihat. ABRI kemudian menahan saya di Kodim 1634 Manufahi selama tujuh bulan, karena saat itu mereka melakukan operasi pembersihan di Aitana. [Kemudian] Komandan Kodim Manufahi menyuruh saya dan anak saya [6 tahun] dan adik laki-lakinya [4 tahun] pergi ke Atauro. Kami ditahan di Atauro empat tahun tujuh bulan dan tujuh hari.⁴⁹²

432. Dalam satu kasus, Marçal Lourenço Ribeiro menggambarkan penangkapannya pada Agustus 1981 karena dicurigai menyediakan makanan untuk Falintil:

Saya ditangkap oleh TNI di kebun Ormahei/Letefoho di Manufahi karena dicurigai membuat kebun di dekat hutan untuk memberi makan kepada Falintil di hutan. Kemudian saya dibawa ke Kodim 1634 Manufahi dan di sana saya dipukul oleh Kasi I [Kepala Seksi Intelijen] dengan sandal empat kali di kepala. Lalu Kasi I menyuruh Hansip masukkan saya dalam bak air selama satu jam, kemudian dikeluarkan dan ditahan dalam sel rahasia untuk kira-kira tiga hari dan dikeluarkan lagi ke ruang tahanan umum, selama dalam tahanan saya disuruh oleh Kasi I membuat sawahnya dan juga membersihkan rumput di sekitar Same selama tiga bulan.⁴⁹³

* Cristiano da Costa dalam Michelle Turner, *Telling East Timor: Personal Testimonies 1942-1992*, Sydney, New South Wales University Press, 1992 (pada edisi bahasa Indonesia, hal. 241). Lihat juga Constâncio Pinto dan Matthew Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle, Inside the Timorese Resistance*, Boston, South End Press, hal. 84-86. Sebuah pedoman penunjuk militer juga menyatakan bahwa “Ternyata dalam sektor timur dukungan penduduk adalah paling militan dan paling sulit untuk dibongkar. Hal ini karena ikatan keluarga yang sangat dekat dan kuat dan juga karena GPK berhasil menguatkan pimpinan politiknya dalam wilayah ini selama beberapa tahun.” [Kodam XVI, Prosedur Tetap (PROTAP) Intelijen No. 01/VI/1982: Petunjuk untuk Kegiatan Intelijen Teritorial di Timor Timur, terjemahan dalam Budiardjo dan Liem, hal. 193-210,

433. Kejadian penyiksaan antara daerah juga bervariasi saat ini karena alasan serupa. Di wilayah timur, korelasi antara penahanan atau penganiayaan dan penyiksaan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah tengah dan barat. Kemungkinan alasan perbedaan ini ialah lebih tingginya proporsi penangkapan dengan sasaran yang sudah ditentukan terhadap anggota jaringan klandestin di wilayah barat dan tengah.⁴⁹⁴ Pernyataan-pernyataan juga menunjukkan bahwa militer menahan anggota jaringan klandestin selama beberapa waktu di pulau utama, di mana mereka diinterogasi dan sering disiksa, sebelum akhirnya dikirim ke Ataúro. Sebagian besar keluarga yang ditangkap, bagaimanapun juga, langsung dikirim ke Ataúro tanpa diinterogasi. Karena wilayah timur memiliki proporsi yang lebih tinggi berkaitan dengan anggota keluarga yang ditangkap dan dikirim langsung ke Ataúro, proporsi tahanan yang mengalami penyiksaan dan penganiayaan di wilayah ini lebih sedikit dibanding di wilayah barat dan tengah. Pada tahun-tahun tersebut orang dari 12 distrik dikirim ke Ataúro.

Setelah Operasi Keamanan

434. Operasi Keamanan berakhir pada akhir 1981 tanpa berhasil menangkap seorangpun tokoh senior Resistansi.* Pada 1982 militer terus menangkap anggota Resistansi bersenjata serta jaringan klandestin dan memindahkan mereka ke Ataúro. Militer membuat banyak penangkapan dengan sasaran yang sudah ditentukan berdasarkan informasi tentang penduduk sipil yang diberikan oleh Hansip, Ratih, dan kelompok pertahanan sipil lainnya.

435. Adelino Soares memberitahu Komisi mengenai penangkapannya karena menjadi anggota klandestin di Uatolari (Viqueque) berdasarkan informasi yang diberikan Ratih kepada militer setempat. Ratih T277 menemukan dokumen milik jaringan klandestin yang menyebut nama Adelino, di tubuh *estafeta* yang ditembak dan dibunuh T277. Dia langsung memberitahu Koramil Uatolari tentang keterlibatan Adelino di jaringan klandestin. Komandan Koramil memerintahkan T330, T91 (penerjemah, orang Timor-Leste), dan seorang anggota Koramil, untuk menangkap Adelino di rumahnya pada 26 Maret 1982. Mengenai penangkapannya, Adelino menggambarkan bagaimana ia diancam dengan senjata lalu dibawa ke Koramil Uatolari. Di sana komandan Koramil menginterogasi dan memukulnya, kemudian wakil komandan koramil memukulnya dengan pistol dan menendangnya dengan sepatu bot militernya. Setelah satu bulan di Koramil, Adelino dan sembilan tahanan lainnya dibawa ke Ataúro dengan helikopter. Dia baru pulang pada 7 Februari 1986.⁴⁹⁵

436. Militer juga melanjutkan praktik menjaga orang-orang yang dicurigai sebagai anggota jaringan gerakan klandestin supaya selalu dekat agar aktivitas mereka

* Beberapa saksi yang pernah ikut serta dalam Operasi Keamanan memberitahu kepada Komisi bahwa kelompok mereka tidak pernah melakukan kontak senjata dengan Falintil, tidak pernah melakukan penangkapan, dan tidak pernah membunuh orang selama operasi itu. Namun, Komisi telah menerima informasi mengenai beberapa pelanggaran fatal pada masa operasi, yang memuncak pada saat konfrontasi antara ABRI dan Falintil di Gunung Aitana, yang dilaporkan menyebabkan kematian sejumlah anggota Falintil dan penangkapan massal (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, untuk informasi lebih lanjut mengenai kejadian ini).

tetap bisa diawasi. Ini juga salah satu cara intel militer menemukan informasi lebih banyak tentang jaringan klandestin. Marito Reis, seorang anggota senior klandestin, menyatakan bahwa dia dipanggil kembali dari tahanan di Ataúro untuk menjadi sopir Kepala Seksi Intel Korem, Willem da Costa. Marito Reis yakin bahwa itu adalah taktik “agar...saya memberi informasi tentang organisasi atau masalah yang ada di Timor-Leste saat itu”. Selama bekerja untuk Willem da Costa, Marito memimpin jaringan klandestin di Dili. Dia ditangkap lagi pada 1982 setelah militer menemukan klip-kliping klandestin.⁴⁹⁶

437. Alexandrina Amaral menggambarkan bagaimana dia ditangkap pada 1982 oleh anggota Koramil Ainaro setelah Kepala Seksi Intel Koramil menuduhnya sebagai istri komandan Falintil Venancio Ferraz. Dia ditahan di sel khusus di Koramil Ainaro dan tidak diberi makanan apapun dan, kecuali menggunakan toilet, dia tidak diperbolehkan mandi selama dua hari dia ditahan di sana. Dia kemudian dibawa ke Dili dan ditahan di Comarca selama sembilan hari sebelum diangkut dengan kapal laut ke Ataúro. Pada 1986, Alexandrina Amaral dibebaskan tetapi memutuskan untuk tetap tinggal di Pulau Ataúro karena dia telah menikah dan membangun rumah di sana.⁴⁹⁷

Akhir 1982 – *Levantamento* Falintil di sekitar Gunung Kablaki

438. Pemberontakan Kablaki terjadi pada 20 Agustus 1982 di sekitar Gunung Kablaki di Desa Mau Chiga, Dare, dan Mulo (Hatu-Builico, Ainaro), Aitutu (Maubisse, Ainaro), dan Rotuto (Same, Manufahi). Komisi melakukan penelitian secara luas di daerah Mau Chiga tentang kejadian Agustus 1982 dan banyak dari paparan berikut diambil dari penelitian tersebut.⁴⁹⁸ Untuk kasus-kasus penangkapan sewenang-wenang terhadap penduduk sipil dari Rotuto dan Aitutu, Komisi bersandar pada pernyataan naratif dan Profil Komunitas.

Penangkapan awal

439. Pada 6 Juli 1982, tiga anggota Falintil mengadakan pertemuan dengan 36 orang dari Mau Chiga di Naillemali (Mau Chiga, Ainaro) untuk merencanakan serangan ke Koramil Hato Builico. Militer Indonesia menerima informasi tentang pertemuan ini dan pada 10 Juli 1982 militer dan anggota Hansip dari Hato Builico memulai operasi dari rumah ke rumah di Desa Gulora, Mau Chiga, dan Hatuquero.⁴⁹⁹ Mereka menangkap sekitar 30 orang, 16 di antaranya menghadiri pertemuan tersebut. Semua tahanan dibawa langsung ke Kodim Ainaro.⁵⁰⁰ Abilio dos Santos Belo, salah satu tahanan, menggambarkan kepada Komisi:

Sampai di Kodim mereka memasukkan kami ke tempat penahanan khusus. Kepala Seksi Intel Koramil melakukan penyelidikan dan menyiksa kami satu per satu. Bukan hanya saya yang dipukuli oleh anggota Koramil dan Kepala Seksi Intel; teman lainnya dipukuli sampai berdarah dan beberapa meninggal di tahanan.⁵⁰¹

440. Militer menangkap para tahanan di Ainaro selama lebih daripada satu bulan sebelum memindahkan mereka ke Comarca. Mereka merupakan orang pertama dari wilayah Gunung Kablaki yang dikirim ke Ataúro.⁵⁰²

Setelah *Levantamento*

441. Walaupun terjadi penangkapan penduduk sipil dari Mau Chiga pada Juli, serangan Falintil tetap dilaksanakan pada 20 Agustus 1982. Tentara Falintil di bawah komando Venancio Ferraz dan Mauhunu menyerang beberapa pos militer dan polisi termasuk Koramil Dare dan kantor polisi di Hato Builico dan pos-pos Hansip di Aitutu, Raimerhei, dan Rotuto.⁵⁰³ Setelah serangan, pasukan militer dari Ainaro, Same, Aileu, Dili, dan Lospalos langsung berkumpul di wilayah tersebut, termasuk Yonif 744 dan 745. Batalion-batalion ini diperkuat oleh anggota Kodim 1633, polisi, dan Hansip.⁵⁰⁴ Pasukan militer membakar rumah-rumah di Dare, menutup sekolah-sekolah, dan memaksa perempuan dan anak-anak untuk menjadi penjaga pos-pos militer.⁵⁰⁵ Setelah membakar rumah-rumah, tentara membangun pos di setiap kampung di daerah tersebut dan menambah kira-kira delapan poskamling (pos keamanan lingkungan) di sekitar Dare.⁵⁰⁶ Pejuang Falintil dan sebagian besar penduduk kabur dari daerah tersebut, sebagian ke Gunung Kablaki. Sekitar 30 orang dari Mau Chiga yang bersembunyi di Goa Nonai tertangkap dan dibawa ke Dare. Kelompok lain dari Mau Chiga bersembunyi di Tisimai, dekat Same, tapi akhirnya menyerah ke Koramil Same.⁵⁰⁷

Penangkapan

442. Orang-orang yang tidak sempat kabur dari desa-desa di Mau Chiga, Dare, atau Mulo, ditangkap oleh militer. Di Mau Chiga seluruh penduduk desa ditangkap secara sewenang-wenang dan dibawa ke Dare. Di desa lain, bukti menunjukkan bahwa militer mencari individu-individu yang dicurigai terlibat dalam serangan atau memiliki informasi yang berguna. Bukti yang menjadi dasar militer melakukan penangkapan sering lemah. Contohnya, Mariano de Araújo dari Mulo memberitahu Komisi bahwa dia ditangkap karena Hansip menyuruh dia melakukan tugas keamanan di Koramil Hatu-Builico. Karena dia tidak pergi, Hansip menangkapnya karena curiga dia terlibat dalam pemberontakan.⁵⁰⁸

443. Di Rotutoo, beberapa anggota Hansip ditangkap.⁵⁰⁹ Luis da Costa Soares memberitahu Komisi bahwa dia ditangkap bersama 18 orang lainnya, yang dicurigai mengambil bagian dalam *Levantamento* di Rotuto. Mereka awalnya dibawa ke Kodim Manufahi, kemudian ke pos Nanggala di Aissirimou (Aileu), Korem Dili, dan akhirnya ke Comarca Balide. Mereka ditahan di Comarca sampai Oktober 1982, saat mereka dikirim ke Ataúro.

.....
* Desas-desus beredar di Mau Chiga bahwa pada 20 Agustus, pada saat ulang tahun berdirinya Falintil, akan ada pemberontakan umum di seluruh wilayah Timor-Leste. [Lihat CAVR dan Fokupers, Laporan Tim Penelitian Perempuan, Apendiks 1.0 "Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dari Sudut Pandang Komunitas: Mau Chiga 1982-1987", Mau Chiga, Ainaro 2003, hal.2].

444. Anggota keluarga orang Falintil yang sudah diketahui, atau keluarga dari orang-orang yang kabur dari desa mereka, juga menjadi sasaran. Luis Nunes menceritakan kepada Komisi bahwa dia kabur ke hutan setelah serangan itu tetapi militer menangkap keluarganya dengan tuduhan sebagai Fretilin, termasuk istrinya Beatris da Costa dan lima anggota keluarga lainnya: Alzira da Silva, Olandina da Costa, Talvina Freitas, Rosantina Seizas, dan Luisa Xavier. Mereka dibawa ke pos militer Rotutoo selama satu malam, kemudian ke Pos Koramil Same selama sembilan hari. Kemudian mereka dikirim ke Ataúro selama tiga tahun.⁵¹⁰

445. Kebanyakan penangkapan di wilayah sekitar Mau Chiga dilakukan oleh Hansip yang sering didampingi seorang perwira ABRI, seperti Kepala Seksi Intel Kodim atau pejabat pemerintah seperti Sekretaris Subdistrik T331.⁵¹¹ Anggota-anggota Hansip yang paling sering disebut namanya kepada Komisi adalah T332, T333, T334, dan T335.^{*} Di Rotuto, Komandan Kodim Manufahi, Komandan Koramil, dan bupati melakukan penangkapan.⁵¹²

446. Beberapa orang ditangkap pada waktu yang berbeda oleh lembaga yang berbeda. Mário Amaral ditangkap oleh Koramil sebelum serangan Mau Chiga dan kemudian sekali lagi beberapa bulan kemudian oleh Kodim. Menurut saudaranya, Domingos Amaral, kedua lembaga tidak saling berbagi informasi:

Baik Koramil maupun Kodim, Polisi, dan instansi militer lainnya punya daftar nama tersendiri untuk menangkap rakyat sipil, karena rakyat yang dipenjara di Kodim tidak diketahui oleh Koramil atau instansi militer lainnya. Begitu juga sebaliknya. Rakyat yang dipenjara di Koramil tidak diketahui oleh Kodim dan instansi militer lainnya yang berkuasa di Ainaro waktu itu. Para ABRI kadang-kadang tidak saling bekerjasama dalam menahan rakyat sipil. Rakyat kelihatannya dijadikan sebagai objek perlombaan ABRI untuk kenaikan pangkat.⁵¹³

Penahanan dan interogasi

447. Penduduk sipil yang ditahan setelah penyerangan diinterogasi selama beberapa jam. Orang-orang yang ditangkap di Kota Mau Chiga, Dare, atau Mulo dibawa ke Koramil di Hato Bulico, Koramil Ainaro, atau Koramil Dare. Mereka yang berasal dari Aituto dibawa ke Kodim Ainaro dan pos-pos militer di Same.[†] Di Rotuto, sebagian besar tahanan dibawa ke Kodim Manufahi dan ditahan di sana selama satu hari sampai tiga bulan.

448. Beberapa tahanan dibebaskan setelah diinterogasi sedang yang lain tetap ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Tahanan dari Mau Chiga dan Mulo yang tidak dibebaskan dibawa ke Kodim Ainaro.⁵¹⁴ Penduduk Mulo menggambarkan

^{*} Hansip lainnya yang disebut ialah: T336, T337, T338, T339, T340, T341, T342, T343, T344, T335, T346, T347, T348, T348, T349, T350, T351, T352, T353, T354, T355, T356, dan T357.

[†] Pernyataan HRVD 2050; Domingas Pacheco ditangkap oleh Yonif 745 di Aituto dan dibawa ke Kodim Ainaro untuk diinterogasi. [Pernyataan HRVD 4910.]

bagaimana sepuluh tahanan disekap di Kodim Ainaro di sebuah ruangan yang sangat kecil sehingga mereka tidak bisa duduk.⁵¹⁵ Yang lain dibawa ke pos ABRI di Lesu Hati dan ditahan di sana antara beberapa hari sampai beberapa minggu.⁵¹⁶ Setelah seminggu, 12 truk Hino berhenti di Lesu Hati untuk membawa para tahanan ke Dili sehingga mereka bisa dikirim ke Ataúro. Truk-truk ini sudah sangat penuh dengan tahanan dari Same dan Ainaro sehingga hanya beberapa orang saja yang bisa naik ke truk. Kepala Desa Aitutu, T358, kemudian mengambil inisiatif sendiri untuk membawa tahanan yang masih tertinggal di Lesu Hati ke Koramil Dare dengan berjalan kaki.⁵¹⁷

Siksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat

449. Perlakuan terhadap tahanan sangat kasar bahkan banyak yang disiksa. Di Ainaro interogasi dan siksaan dilakukan oleh para anggota Kodim Ainaro asal Indonesia, seperti Komandan T359,⁵¹⁸ Komandan Koramil T360,⁵¹⁹ Komandan Koramil Sersan T361,⁵²⁰ Sersan T362,⁵²¹ serta para anggota Yonif 744 di pos Aitutu⁵²² dan pasukan Yon Zipur 5 yang berlokasi di Dare mulai dari 5 September sampai Desember.⁵²³ Camat Hatu-Builico, T363, juga disebut di dalam sebuah pernyataan.⁵²⁴ Di Kodim Manufahi, Kepala Seksi Intel T364, orang Indonesia, Komandan Kodim dan Babinsa T365, orang Timor-Leste, menginterogasi dan memukuli penduduk. Perincian dari kasus-kasus tersebut termasuk:

- Domingos Melo menceritakan kepada Komisi bahwa dia pingsan setelah kepalanya dipukul dengan kayu. Saat sadar, Domingos menyadari bahwa lututnya mengalami luka tusuk dan dia berada di sel tahanan.⁵²⁵
- Seorang perempuan Timor-Leste, penduduk Mau Chiga, menggambarkan bagaimana pada hari terjadinya serangan militer, tentara menembaki penduduk sipil. Dia berusaha lari tetapi tertangkap dan tentara menendang dan menusuk dengan senjata. Salah satu orang yang bersamanya saat terjadi serangan, João Tilman, tewas saat terjadi kontak senjata. Tentara memotong leher Tilman dan memaksa wanita itu membawa kepala itu sampai Dare. Ketika mereka sampai di desa Dare, kepala itu dikubur dan perempuan tersebut dibawa ke Kodim Ainaro di mana dia ditahan selama tiga bulan. Dalam tahanan dia disetrum wajahnya. Dia juga dipaksa memeluk agama Islam. Karena menolak, dia dipukul sampai pingsan. Dia dan seorang tahanan lainnya juga dipaksa mencari Falintil di hutan selama satu setengah bulan. Ketika mereka kembali dengan tangan hampa, dia dipaksa “menikah” dengan seorang tentara selama satu tahun.⁵²⁶
- Rui Soares de Araújo, seorang anggota Hansip, ditahan dan disiksa di Koramil Ainaro karena memberikan informasi penting kepada Falintil sebelum penyerangan. Dia memberitahu Komandan Falintil Venancio Ferraz tentang jumlah tentara dan senjata di Koramil Dare, juga tentang jadwal patroli tentara serta saat-saat kantor Koramil akan kosong. Ia menuturkan kepada Komisi:

Setelah kejadian Mau Chiga, saya dicurigai oleh Danramil Dare (Hato Builico) Ainaro, bekerjasama dengan Falintil dalam operasi serangan pada Koramil Dare itu...Satu minggu kemudian, pada tanggal 26 Agustus 1982, saya ditangkap di pasar oleh perwira polisi T366 dan dibawa ke Koramil Ainaro. Di sana saya diinterogasi oleh Kepala Seksi Intel dan Polisi T366, kemudian T366 menghantam saya dengan kabel listrik, menampar dan menendang seluruh badan saya berulang-kali, sehingga saya jatuh pingsan di lantai. Setelah itu saya dibawa ke Kodim Ainaro dan satu bulan kemudian, dipindahkan...ke Comarca Balide. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 1982, saya dibawa ke pelabuhan Dili dan dinaikkan ke kapal feri Seiçal untuk dibuang ke Atauro bersama 11 orang dari Ainaro.⁵²⁷

450. Kekerasan seksual terhadap tahanan juga dilakukan terhadap banyak tahanan perempuan setelah levantamento tersebut. [Lihat Bab 7.7: Pemerksaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual.] Contohnya, enam perempuan yang dibawa ke pos ABRI di Aitutu disiksa dan diperkosa. Beberapa diperkosa di Lesu Hati itu sendiri. Salah satu korban pemerksaan memberitahu Komisi:

Setiap malam saya selalu dibuntuti oleh ABRI dan Hansip karena saat itu saya berumur sekitar 14 tahun. Sebelum saya diperkosa, saya disiksa dengan berbagai macam cara. Saya dipukul dengan senjata, dibakar, disiram dengan air, dan ditelanjangi. Mereka membawa saya ke luar (ke tengah alang-alang) sehingga terjadilah apa yang tidak disangka oleh saya. Pada malam pertama saya diperkosa oleh seorang Timor-Timur, T367, dari Yonif 744, pangkat Kopral. Pada malam kedua saya diperkosa oleh T368, Yonif 744, seorang Timor-Timur juga berpangkat Kopral. Pada malam ketiga saya diperkosa oleh T369 dari Yonif 744, pangkat Kopral. Setelah kejadian itu...tubuh saya penuh dengan darah.⁵²⁸

Tahanan desa

451. Selain menahan para korban di komando militer, militer juga menggunakan taktik “tahanan desa”. Ini melibatkan pemusatan penduduk sipil dari wilayah sekitar ke dalam batas desa-desa tertentu dan mengurung mereka dalam bangunan atau tempat-tempat umum dan pribadi.

452. Contohnya, Komisi mendengar banyak penduduk Mau Chiga dibawa ke Dare setelah ditangkap. Pertama-tama mereka didaftar oleh Koramil Hatu-Builico kemudian mereka dibagi dalam kelompok. Beberapa orang dibawa ke pasar dan yang lain ke sekolah dasar di belakang Koramil. Kalau pasar dan sekolah penuh, para tahanan dibawa ke rumah-rumah pribadi di Dare. Penahanan seperti ini berlangsung sampai beberapa bulan.

453. Tahanan yang disekap di pasar membangun rumah mereka sendiri dari kayu dan alang-alang. Mereka dijaga ketat dan hanya bisa mencari makanan atau kayu bakar dalam kelompok setelah meminta izin dari Koramil. Seorang anggota Koramil kemudian mendampingi kelompok ini dan kelompok ini harus melaporkan diri kembali ke Koramil setelah pulang. Jika seseorang berkeliaran sendiri atau kembali terlambat, dia akan dimasukkan ke tangki ikan di depan Koramil Dare. Para tahanan yang disekap di sekolah dimasukkan ke tiga dari empat ruangan besar di sekolah tersebut dan tahanan dari satu ruangan tidak boleh berbicara dengan tahanan dari ruangan lain.

454. Selain kondisi tahanan yang menyedihkan, pengalaman para tahanan menjadi bertambah buruk karena kekasaran para penangkapnya dan kekebalan hukum yang dimiliki militer dan antek-antek mereka. Komisi mencatat berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan terhadap penduduk sipil selama kebebasan bergerak mereka diatasi dengan cara ini. Pelanggaran berat itu termasuk pembunuhan sadis yang kadang dilakukan di muka umum untuk menyorok penduduk.* Pemerkosaan berskala luas dan bentuk kekerasan seksual lainnya oleh anggota militer dan Hansip juga dilaporkan.[†]

455. Penyiksaan dan penganiayaan dilakukan tidak hanya untuk menghukum individu tapi juga untuk menanamkan rasa takut di dalam komunitas. Para korban disiksa di depan kerumunan orang atau disuruh memberitahu yang lain tentang penyiksaan yang mereka terima. Contohnya, Leonel Cardoso Pereira dari Aitutu menuturkan tentang bagaimana kakak laki-lakinya, Fernão, disiksa sepanjang jalan dari rumahnya sampai dia tiba di rumah Hau Teo yang dipakai sebagai pos Hansip. Fernão diikat ke sebuah tiang selama satu hari satu malam tanpa diberi makan dan setiap kali anggota Hansip masuk atau keluar pos, mereka menendang atau memukul Fernão.⁵²⁹ Adelino de Araújo yang saat itu berusia 14 tahun dan seorang TBO ditahan bersama ayahnya beserta kakak laki-lakinya di Kablaki, mengalami perlakuan yang merendahkan martabat yang serupa:

Setelah sekitar dua hari dengan mereka [tentara di pos Zipur] saya mulai melihat alat kelamin dan telinga tergantung di salah satu pohon pinus di pos. Setelah satu minggu atau lebih, mereka membawa saya ke pos Koramil lagi. Saya diikat ke tiang bendera sekitar jam 8 pagi. Pakaian saya dilepas sampai telanjang dan mereka memberi saya celana dalam

* Satu contoh saja, Bernardino dos Reis Tilman menyaksikan Komandan Zipur 5 T370 memenggal kepala seorang pria bernama Tomás dengan kapaknya di depan penduduk lokal. Kemudian dia memerintahkan agar kepala almarhum dimasak di markas Koramil di Dare. Kemudian dia memaksa dua anggota Batalionnya untuk memakan kepala sambil dia memotret. Dia juga menggigit penis pria yang sudah mati hingga putus dan memerintahkan beberapa anggota memotret kejadian ini yang kemudian dia tunjukkan ke penduduk lokal, sambil mengatakan "nanti, kalian semua, saya akan makan kalian seperti ini. Kepala kalian akan saya potong dan saya akan memakan[nya] seperti ini". [Wawancara CAVR dengan Ana Britos, Mau Chiga, Ainaro, 29 Mei 2003. Ana Britos adalah istri almarhum dan dia menerima informasi tentang nasib suaminya dari Bernardino dos Reis Tilman.]

† Komisi juga menerima laporan bahwa anggota militer dan Hansip memerkosa lima perempuan di belakang pasar, dua di antaranya sedang hamil saat diperkosa. [CAVR dan Fokupers, Laporan Tim Penelitian Perempuan, Apendiks 1.0 Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dari Sudut Pandang Komunitas: Mau Chiga 1982-1987, Mau Chiga Ainaro, 2003, hal. 8-9.]

untuk saya pakai sementara saya masih terikat. Lalu, saya dilepas dari tiang bendera dan disuruh membawa kotak kosong di bahu saya, berjalan menuju pos Zipur. Sepanjang jalan saya disuruh berteriak di hadapan orang-orang dan berkata: “Jangan ikut pantat Falintil! Kalau kalian ikut Falintil, kalian akan mengalami nasib yang sama!” Sampai di pos Zipur, mereka mengambil foto saya. Saya minta pakaian saya sebelum mereka mengambil foto tetapi mereka tidak memberikannya. Baru sore hari mereka memberikan pakaian saya kembali.”⁵³⁰

Pemindahan paksa setelah penyerangan

456. Setelah pemberontakan tersebut, sejumlah besar penduduk dari wilayah yang terlibat pemberontakan dipindahkan dari rumah mereka di gunung ke daerah pesisir. Walaupun secara teknis ini merupakan pemindahan paksa penduduk sipil, di mata mereka yang dipindahkan ini dianggap sebagai “penahanan”. Sebagai contoh, saat Dare sudah tidak mampu lagi menampung pengungsi dari Mau Chiga, komandan Koramil meminta bantuan kepada kepala desa Nunu Mogue (Hatu-Builico, Ainaro). Kepala desa tersebut setuju menampung sebagian dari para tahanan di Nunu Mogue dan gubuk-gubuk sederhana dibangun untuk menampung mereka. Mereka dibatasi hanya di wilayah Nunu Mogue namun tidak diberi makanan samasekali dan hanya bisa menggantungkan diri pada kebaikan hati penduduk Nunu Mogue yang memberi mereka tanah untuk membuat kebun. Setelah dua tahun hidup dalam kondisi seperti ini, komandan Koramil Dare memanggil para tahanan tersebut kembali ke Dare.⁵³¹

457. Kelompok lain yang terdiri atas 431 orang, 202 laki-laki dan 229 perempuan dari Mau Chiga dan Dare, dikirim ke Ataúro.* Kelompok lain yang terdiri atas 100 orang lebih dari wilayah tersebut dikirim ke Dotik (Manufahi) di pesisir selatan pada 7 Januari 1983. Mereka bergabung dengan 50 orang yang telah ditahan di Kodim Same, termasuk beberapa anggota Fretilin.⁵³² Luis Sarmiento Lin menceritakan kepada Komisi bahwa dia terlibat dalam serangan di Rotuto dan termasuk bagian dari kelompok yang dikirim ke Dotik setelah penangkapannya. Dia menggambarkan bagaimana tahanan di Dotik diminta oleh satu peleton tentara ABRI untuk berdiri dengan tangan terikat, memandang matahari dari pukul 07.00 sampai pukul 12.00.⁵³³ Dia hanya mendapat satu kali makan setiap hari. Setelah tiga tahun di Dotik, Luis menghabiskan dua tahun berikutnya menjaga Koramil Hatu-Builico atas perintah Komandan Koramil. Setelah itu dia diizinkan pulang ke rumahnya di Rotuto.⁵³⁴ Orang lain yang sebelumnya ditahan di Kodim Same dipaksa pindah ke Raifusa (Manufahi) atau ke Ataúro.

* Wawancara CAVR dengan Abilio dos Santos, Sekretaris Desa Mau Chiga sejak 1991, Mau Chiga, Ainaro, 4 Juni 2003. Abilio dos Santos mengambil inisiatif untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang nasib setiap orang di komunitas Mau Chiga termasuk daftar nama semua tahanan setelah *Levantamento* Mau Chiga. [Lihat juga Abilio dos Santos Belo, Kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, Dili, 28-29 Juli 2003; dan Bagian 6: Profil pelanggaran hak asasi manusia.]

Penahanan selama gencatan senjata: Maret – Agustus 1983

458. Pada 23 Maret 1983 sebuah kesepakatan gencatan senjata ditandatangani antara ABRI dan Falintil sebagai kelanjutan dari pertemuan-pertemuan yang berlangsung selama beberapa bulan di tingkat desa (dikenal sebagai ‘kontak perdamaian’) dan kesepakatan damai di tingkat lokal dengan komunitas-komunitas di distrik-distrik timur. Gencatan senjata bertahan sampai awal Agustus 1983. Meski ada penghentian permusuhan formal selama lima bulan tersebut, Komisi menerima bukti bahwa pihak militer terus melakukan penahanan sewenang-wenang dan menyiksa orang yang dicurigai sebagai anggota klandestin. Pindahan para warga sipil ke Ataúro juga berlanjut selama gencatan senjata.

459. Kasus penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan lainnya yang dilaporkan telah terjadi selama gencatan senjata menunjukkan bahwa program militer untuk mengidentifikasi para anggota klandestin atau anggota Fretilin/Falintil berlanjut selama periode tersebut dan penangkapan-penangkapan ini dilakukan bersama antara Hansip dan Ratih serta satuan-satuan militer, khususnya Pasukan Khusus. Beberapa kasus ini termasuk:

- Abilio Soares yang mengatakan kepada Komisi bahwa pada 15 April 1983 seorang Ratih bernama T371 dan Hansip T372 menangkap 20 orang laki-laki dari Desa Caicua (Vemasse, Baucau).^{*} Mereka dipisah dalam kelompok-kelompok dan kelompok Abilio dibawa ke sungai, ditutup matanya, dan dipukuli. Dua minggu kemudian pada 1 Mei 1983, Yonif 745 dan Hansip menangkap orang-orang yang sama dan membawa mereka ke Tacitolu (Dom Aleixo, Dili) dan kemudian ke satuan Yonif 745 di Dili. Dua dari tahanan tersebut, Domingos dan Nahe Dasi, dilaporkan ditampar dan kaki mereka diinjak. Pada 18 Mei 1983 militer membebaskan 11 tahanan dan mengirim sembilan orang ke Ataúro.⁵³⁵
- Daniel “Bernabe” Pereira, yang menggambarkan penangkapannya pada Mei 1983 di Laga (Baucau) oleh Komandan Kompi Yonif 144 T373. Dia dicurigai sebagai anggota Falintil. Dia ditahan selama tiga hari tiga malam, dipukuli dan disundut dengan rokok.⁵³⁶
- Dua deponen dari Vessoru (Uatolari, Viqueque), bersaksi bahwa mereka telah ditahan pada 4 Juni 1983 karena dicurigai bekerja dengan Falintil. Gilbeiro Pinto Fernandes dibawa ke Pos Kopassandha oleh wakil komandan Kopassandha T374, atas perintah komandan Kopassandha T375. Di sana dia ditahan bersama Manuel Lopes, Lourenço Lopes, Valenti, dan Baltazar Mascareinhas. T374 kemudian memanggil dia ke ruang interogasi untuk diinterogasi di mana Gilbeiro Fernandes mengatakan bahwa dia dipukuli,

.....
^{*} Nama dari orang-orang yang ditahan dan umurnya pada waktu itu adalah: Abilio Soares (48), Biana (20), Jaime (33), Alfredo (22), Delfin (42), Arnaldo (28), Feliciano (45), Cai Dasi (41), Aquilus (30), Jeremias (40), Mário Correia (20), Naha Dasi (34), Rubi Dasi (32), Domingos Guterres (50), Naha Hare (46), Bosi Hari (38), Sina Ono (37), Domingos Pinto (44), José Sina Du (28), dan Julião (39).

ditendang, dan dipukul dengan senjata sehingga dua giginya tanggal. Setelah dipukul, dia digantung dari atap selama 15 menit, kemudian interogasi dilanjutkan.⁵³⁷

- Komisi telah menerima pernyataan dari seorang Timor-Leste bahwa dia ditangkap pada Juli 1983 di Urahou (Ponilala, Ermera) oleh tentara ABRI. Dia ditahan di Kodim Ermera selama 15 hari di mana dia diinterogasi sambil dipukuli, ditendang, dan disundut dengan rokok menyala. Dia kemudian dipindah ke Comarca di Dili sampai September 1983.⁵³⁸

Kegagalan gencatan senjata dan Operasi Persatuan, Agustus 1983

460. Gencatan senjata samasekali gagal pada awal Agustus 1983 dengan sejumlah pemberontakan (*levantamento*) di Distrik Viqueque dan Lautém, hampir persis satu tahun setelah *levantamento* di sekitar Gunung Kablaki. Sekali lagi, militer Indonesia bereaksi dengan penahanan penduduk sipil, penganiayaan, dan penyiksaan, dalam skala yang luas sekaligus dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya. Gencatan senjata telah memberi kesempatan kepada Fretilin untuk mendekati komunitas-komunitas dan menjelaskan pentingnya perjuangan.⁵³⁹ Akibatnya, jaringan klandestin meluas, terutama di distrik-distrik daerah timur di mana Fretilin/Falintil paling aktif dan di mana mereka bertambah kuat.* Komisi mendengar insiden-insiden berikut pada atau sekitar 8 Agustus 1983:

- Sebuah serangan Falintil terhadap pangkalan militer di Buicaren, di daerah Kraras, yang berakibat tewasnya 12 orang anggota Batalion Zipur [zeni tempur].⁵⁴⁰
- Sekelompok Hansip membangkang dan bergabung dengan Falintil di hutan. Beberapa serangan lanjutan di bagian-bagian lain Viqueque termasuk di Uato Carbau pada 19 Agustus 1983[†] dan Uatolari⁵⁴¹ juga dilaporkan telah terjadi saat itu.
- Ratusan anggota organisasi pertahanan sipil Wanra dan Hansip serta orang-orang lainnya yang masih kuat kabur dari desa-desa di Mehara (Tutuala, Lautém), Loré dan Luro (Lospalos, Lautém), dan Serelau (Moro, Lautém) untuk bergabung dengan Falintil.⁵⁴²
- Di Mehara, sekelompok Hansip di bawah komando Raja Miguel dos Santos (Kuba), merampas senjata dari polisi dan Koramil, termasuk sebuah senapan mesin Metralhadora⁵⁴³ kemudian bergabung dengan Falintil.⁵⁴⁴ Hal ini sering disebut 'perlawanan bersenjata' (*Levantamento Armada*).⁵⁴⁵

* Menurut Pastor Domingos Soares (Padre Maubere), perdamaian tersebut adalah taktik Xanana untuk mencari peluang untuk restrukturisasi Resistansi. Padre Maubere tiba di Timor-Leste dari Portugal pada Mei 1980 dan dilantik sebagai pastor baru di Ossu pada Juni 1980. Parokinya juga mencakup Viqueque dan Lacluta. [Wawancara CAVR dengan Padre Maubere (Domingos Soares), Dili, 22 September 2003.]

† Serangan-serangan di Uato-Carbau dilaporkan di sejumlah desa, termasuk Dara Gata, (19 Agustus 1983). Pernyataan HRVD 7340.

- Di Subdistrik Iliomar (Lautém), empat anggota Hansip Timor-Leste, yakni T338, T339, T440, dan T394, melaporkan ke Koramil bahwa dua anggota Falintil telah meminta mereka ikut dalam serangan terhadap militer di Iliomar malam berikutnya. Para Hansip tersebut yang takut akan dampak dari serangan tersebut, membunuh kedua pejuang Falintil tersebut.⁵⁴⁶

461. Sebagai tanggapan atas serangan-serangan tersebut atau atas serangan-serangan yang gagal, Operasi Persatuan dilancarkan pada 17 Agustus 1983. Pada 9 September pemerintah Indonesia mengumumkan sebuah keadaan darurat dan lima hari kemudian Presiden Soeharto memerintahkan tindakan 'sapu bersih' Resistansi bersenjata.⁵⁴⁷

462. Sebagai tindak lanjut, pihak militer memperluas serangan besar-besaran di Distrik Viqueque dan Lautém yang juga mencapai wilayah-wilayah lain termasuk Baucau, Aileu, dan Dili. Pengeboman dilakukan antara Agustus 1983 dan Juni 1984. Intensitas operasi tersebut tecermin dalam penelitian kuantitatif Komisi. Ini menunjukkan peningkatan pelanggaran hak asasi manusia pada akhir 1983, terutama di distrik-distrik timur seperti Lautém, Viqueque, dan Baucau. Pelanggaran hak asasi manusia berat mencakup pembantaian rakyat sipil, pemindahan paksa penduduk sipil ke wilayah lain, dan pemerkosaan serta perbudakan seksual terhadap perempuan-perempuan dari wilayah tersebut. [Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan, dan Bab 7.7: Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual.] Sebagai tambahan, Komisi mencatat peningkatan tajam kejadian-kejadian penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan.

463. Seperti dalam operasi lainnya, orang-orang yang dicurigai sebagai anggota jaringan klandestin, terutama anggota Hansip dan Ratih yang banyak terlibat dalam penyerangan, menjadi sasaran penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan. Karena begitu banyak anggota Resistansi telah kabur dari rumah mereka untuk bergabung dengan Falintil, akibatnya serangan ABRI tersebut dirasakan oleh penduduk sipil biasa, terutama keluarga dari mereka yang telah melarikan diri.

Kraras

464. Sebagian besar penduduk Kraras (Viqueque, Viqueque) telah melarikan diri ke Gunung Bibileo setelah serangan-serangan tersebut. Sebuah operasi kemudian dilancarkan untuk mencari warga desa dan dipimpin oleh Yonif 745 dan Chandraca 7 (Kopassandha), di bawah komando Mayor (Letnan Kolonel) T364, Kapten T377, dan Komandan Kodim Viqueque T378.* Mereka melakukan serangan intensif ke gunung itu, melakukan pengeboman dengan pesawat-pesawat, serta mengepung gunung tersebut.⁵⁴⁸ Sebagian besar penduduk terpaksa menyerah.⁵⁴⁹

465. José Andrade dos Santos mengatakan kepada Komisi bahwa setelah pembantaian di Kraras, seluruh wilayah dicengkeram rasa takut. Dia menjelaskan banyak orang

* Chandraca 7 (Kopassandha), terdiri atas 120 anggota Pasukan Khusus, mendarat di Viqueque pada 28 Agustus 1983.

dari wilayah itu ditangkap secara sewenang-wenang, ditahan, dan disiksa selama kira-kira satu atau dua minggu.⁵⁵⁰ Thomás Guterres dari Uatolari menjelaskan bagaimana beberapa bulan setelah kejadian Kraras, tiga atau empat personel militer datang ke setiap rumah pada siang hari atau tengah malam dan memanggil dari luar. Saat pintu rumah dibuka, mereka menyerbu masuk dan membawa tersangka. Apabila mereka tidak menemukan orang yang mereka cari, sering mereka menahan anggota keluarga tersangka tersebut, termasuk perempuan.⁵⁵¹

466. Penangkapan terjadi secara luas dan korban-korban ditangkap di hutan maupun di kampung sekitarnya.⁵⁵² Mariano Soares pada saat berbicara dalam Audiensi Publik CAVR tentang Penahanan Politik sehubungan dengan Kraras, menjelaskan:

*Setelah pembantaian pada bulan Agustus 1983, banyak orang yang dicurigai mendukung penyerangan ditangkap. Kodim 1630 [Viqueque] mencari orang-orang yang terlibat gerakan klandestin dan...juga mulai menangkap penduduk biasa Viqueque untuk dipindah ke Ataúro.*⁵⁵³

467. Komisi mendengar tentang sebuah penangkapan besar-besaran setelah *levantamento*. Di Uma-Uain (Viqueque, Viqueque) João Ximenes de Araújo menceritakan bagaimana Batalion 744 dan 745 bekerjasama untuk menahan 100 penduduk sipil dari wilayah tersebut dan menahan mereka di Kodim Viqueque. Mereka kemudian dibawa ke Laga (Baucau) dan dari sana dikirim ke Ataúro.⁵⁵⁴

468. Akan tetapi, dalam kasus-kasus penahanan sewenang-wenang lainnya, para korban menjadi sasaran dan ditahan sendiri-sendiri atau dalam kelompok yang terdiri atas paling banyak 15 orang. Seperti dalam tindakan-tindakan serupa, militer mencari orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku pemberontakan, anggota gerakan klandestin, dan warga sipil yang mungkin memiliki informasi yang relevan.

469. Matias Miguel ditangkap oleh Sekretaris Desa T379, dikirim ke Kodim Viqueque selama tiga hari, kemudian dipindahkan ke Comarca di Dili selama tiga tahun.⁵⁵⁵ Di Distrik Viqueque, pernyataan yang diterima Komisi menunjukkan bahwa para anggota klandestin menjadi sasaran. Mário de Jesus Sarmento, seorang anggota Fretilin dari Carau-Balu (Viqueque, Viqueque), ditangkap oleh pamannya, anggota ABRI T380. Warga sipil Pedro Soares, Inácio Pinto dan Paulo Gomes, juga ditangkap. Camat T256 dan kepala Seksi Intel dari kecamatan tersebut kemudian menginterogasi keempat anggota klandestin tersebut selama tiga malam di Carau-Balu sebelum mereka dibawa ke Kodim Viqueque.

470. Ernesto Freitas juga dari Carau-Balu, menggambarkan bagaimana T256 dan Kepala Seksi Intel T382 menghampirinya di kantor pemerintahan lokalnya dan menuduhnya telah mengadakan pertemuan dengan anggota Falintil bernama Roque. Malamnya ketika dia pulang dari kerja, dia disuruh pergi ke Kodim Viqueque. Di Kodim dia diinterogasi, kemudian dikirim ke rumah milik Kepala Seksi Intel di Desa Monumento (Viqueque Kota, Viqueque). Akhirnya dia ditahan selama tiga bulan di rumah T383, sekretaris subdistrik, di mana tentara dari Yonif 745 memukulinya.⁵⁵⁶

471. Penangkapan juga terjadi di luar wilayah tersebut. António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak) ditangkap di Dili oleh SGI ketika mereka mengetahui bahwa dia memegang uang untuk diberikan kepada Resistansi. Dia kemudian ditahan di Korem, Markas Polisi militer di Balide, kemudian dikirim ke Kupang bersama 68 tahanan lain.⁵⁵⁷

472. Carlos Alfredo da Costa Soares menceritakan kepada Komisi tentang penahanan seluruh anggota satu divisi Hansip. Dia menceritakan bagaimana dia dan 159 anggota Hansip lain ditangkap setelah pemberontakan Kraras dan dibawa ke Kodim Viqueque. Setelah beberapa minggu mereka dinaikkan ke truk dan dipindah ke Kodim Baucau, di mana Komandan Kodim menginterogasi mereka satu per satu. Dia dipukuli dengan popor senjata tiga kali oleh seorang anggota Kodim. Malam yang sama mereka dinaikkan ke perahu dan dibawa ke Ataúro di mana mereka tinggal sampai 1986, saat Koramil mengizinkan mereka pulang.^{*}

473. Penumpasan militer di Viqueque berlangsung sekitar tiga bulan tetapi penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan berlanjut sampai 1984.⁵⁵⁸ Laporan yang diterima menyebutkan bahwa pada Februari 1984, anggota Chandraca (Kopassandha) masih memanggil orang-orang ke Kodim sehubungan dengan kejadian di Kraras.⁵⁵⁹ Yang lainnya, seperti José Gomes, melarikan diri ke hutan dengan Falintil setelah pemberontakan dan ditangkap saat kembali. José Gomes ditahan selama enam bulan oleh Chandraca 7 Grup 2 setelah Pemberontakan Kraras dan selanjutnya diinterogasi dan disiksa selama dua minggu di Kodim Viqueque.

474. Komando militer teritorial adalah tempat utama untuk menangkap tahanan. Di Subdistrik Viqueque, kebanyakan tahanan dibawa ke Kodim 1630 Viqueque.⁵⁶⁰ Di sana, Camat Martinho Fernandes dan Kepala Seksi Intel Amo Sani melakukan interogasi.⁵⁶¹ Penduduk dari wilayah-wilayah sekitar Kraras seperti Beaçó dan Ossu juga dibawa ke Kodim Viqueque oleh anggota Kopassandha atau Koramil setempat.⁵⁶² Pangkalan Yonif 745 di Olo Bai juga digunakan untuk menangkap tahanan. Menurut Pastor Domingos Soares (Padre Maubere), tempat tersebut terkenal kejam karena pembunuhan-pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan para tahanan yang terjadi di sana. Penahanan di markas 745 biasanya berlangsung satu minggu sampai enam bulan.⁵⁶³

475. Bangunan-bangunan umum juga diambilalih dan digunakan untuk menangkap tahanan. Di Viqueque, gedung parlemen lokal yang juga dikenal sebagai Gedung PIDE Portugis[†] diambilalih.⁵⁶⁴ Mariano Soares mengatakan kepada Komisi bahwa dia disekap di WC di gedung 'PIDE Portugis' selama sepuluh hari setelah dia diinterogasi di Kodim. Sekali lagi, penahanan di 'PIDE Portugis' biasanya berlangsung satu minggu sampai enam bulan.

* Wawancara CAVR dengan Carlos Alfredo Soares, Ataúro, Dili, 26 Oktober 2003. Lihat juga HRVD 9014, yang menyatakan bahwa 99 orang Hansip dipindah paksa oleh ABRI karena dicurigai terlibat Pemberontakan Kraras.

† Bangunan tersebut dibangun oleh pemerintah Portugis dan merupakan markas kepolisian rahasia (PIDE) distrik itu pada zaman Portugis.

Uato Carbau

476. Di Subdistrik Uato Carbau (Viqueque), pejabat desa lokal dan Kopassandha dituduh bertanggung jawab atas sebagian besar penahanan sewenang-wenang.⁵⁶⁵ Komisi mendengar dari Aderito de Carvalho bahwa 12 orang laki-laki ditangkap pada 15 Agustus karena dicurigai terlibat dalam Pemberontakan Kraras. Mereka disekap dalam rumah kosong.⁵⁶⁶ Setelah serangan di Uato Carbau pada 19 Agustus, delapan laki-laki lainnya dilaporkan ditahan dan disekap di Koramil Uato Carbau. Lindolfo de Jesus Fernandes, seorang anggota klandestin, menceritakan kepada Komisi bahwa dia ditangkap sepulangnya dari sawah karena dicurigai membantu Falintil. Dia disuruh menemui camat Uato-Carbau, T299, seorang Timor-Leste, kemudian ditahan di Koramil bersama tujuh orang lain.[†]

477. Para tahanan dari Uato Carbau hampir semuanya dibawa ke Koramil Uato Carbau. Sebagian tetap di Koramil selama masa penahanan mereka, sementara lainnya dipindah ke markas Yonif 511 di Viqueque.

Iliomar

478. Di Distrik Lautém, Yonif 641, Yonif 520, dan Yonif Linud 100, bekerjasama dengan Kodim dan Nanggala unit 2 dan 4.⁵⁶⁷ Di Iliomar, menurut Ernest Chamberlain, Hansip yang juga anggota klandestin adalah sasaran utama militer dan Hansip 'pro-integrasi' lainnya dikerahkan untuk menangkap, menyiksa, atau membunuh mereka.⁵⁶⁸ Sebagian besar tahanan kemudian dibawa ke Koramil Iliomar, tempat interogasi dan penyiksaan terjadi.⁵⁶⁹ Anggota Hansip membantu menerjemahkan untuk Danramil T385.⁵⁷⁰ Marcos Fernandes memberi kesaksian bahwa para anggota Ratih yang ditangkap pada Oktober semuanya dibawa ke Kodim Lautém.⁵⁷¹

479. Penelitian Komisi menunjukkan bahwa sasaran utama penahanan di Iliomar adalah Hansip dan Ratih setempat yang terlibat klandestin.⁵⁷² Di Iliomar dan sekitarnya, komandan Koramil T385, T386, (Chandraca Kopassandha), camat T387 (orang Timor-Leste), dan anggota DPRD T255 semua disebut berhubungan dengan kasus penangkapan yang dilaporkan.[†] Bagaimanapun, sebagian besar penangkapan di wilayah ini dilakukan oleh para anggota Hansip prointegrasi termasuk empat orang yang menolak ikut serta dalam penyerangan Koramil. T389, seorang Timor-Leste, dicatat terlibat dalam 15 kasus penangkapan sewenang-wenang yang dilaporkan ke Komisi, serta menyuruh anggota Hansip lain berpartisipasi.⁵⁷³

* Kemudian Chiquito, Manuel de Conceição, dan saudaranya Hermenegildo de Conceição (anggota Frettilin), Armando Guterres da Silva Freitas, Jeremias Xavier, Afonso da Silva, dan Gaspar de Carvalho (seorang anggota klandestin) bergabung bersamanya. [Pernyataan HRVD 7344; 7340; 7522; dan 7523.]

† Komandan T385 [Koramil] telah disebutkan dalam Pernyataan HRVD: 2113; 3930; 3938; 4399; 4407; 3925; 3949; 4384; 4393; 4397; 4436; dan 4445. T386 [atasan Kopassandha], anggota senior Tim Chandraca (Kopassandha), di Iliomar telah disebutkan dalam Pernyataan HRVD: 4371; 3951; 4436; 3947; 4376; dan 3952. T387 [camat Iliomar] telah disebutkan dalam Pernyataan HRVD: 4408; 3949; 4002; 2113; 3947; dan 3927. T255 telah disebutkan dalam Pernyataan HRVD: 2113; 3918; 3930; 3972; 4399; 4408; dan 3951.

480. Erminio Pinto menggambarkan bagaimana perwira tinggi Kopassandha T386 dan komandan Koramil T385 mengetahui tentang jaringan klandestin Hansip di wilayah mereka melalui Filomeno da Gama yang kemudian dibunuh. Beberapa saat kemudian, mereka menangkap empat orang Hansip: Erminio Pinto, Ernesto Madeira, Carlos da Costa, dan Luis Lopes. Kemudian, pada 30 September, T386 dan T387 bersama-sama komandan Hansip T389 dan anggotanya T390 menangkap lima orang lagi dari Iliomar: Carlos da Costa, Luis Lopes, Carlos Correia (penduduk sipil), Antônio Geronimo (penduduk sipil), dan Belmonte Geronimo.

481. Penangkapan Hansip di Iliomar berlanjut sampai Oktober dengan semakin banyaknya anggota klandestin yang diidentifikasi. Marcos Fernandes, seorang Ratih, menceritakan kepada Komisi bahwa seorang Ratih/Hansip bernama Lourenço Marques yang lari ke hutan beberapa saat setelah insiden di Iliomar, menyerah pada 3 Oktober. Dia ditangkap Komandan ABRI Grup 3, Mayor T391 dari Indonesia, dan disiksa selama seminggu sampai akhirnya dia menyebutkan nama-nama anggota Ratih yang pernah membantu Falintil. Antara 10 dan 13 Oktober 1983, ABRI menangkap 15 Ratih dari wilayah Iliomar.* Semuanya dibawa ke Kodim Lautém.

Mehara

482. Di Desa Mehara (Tutuala, Lautém), pihak militer memerintahkan Batalion Satuan Teritorial 515, 641, Linud 100, dan Komando Grup 1, 2, dan 4, di bawah pimpinan Letnan Dua T392 untuk melakukan penangkapan besar-besaran terhadap warga Mehara.⁵⁷⁴ Batalion 541 dan 641 menangkap warga sipil di Mehara dan dari kampung-kampung Loikere dan Porlamanu, Mehara (Tutuala, Lautém).

483. Sebagian besar pernyataan yang diterima berasal dari para perempuan di Desa Mehara. Istri para Hansip yang melarikan diri ditangkap dan diinterogasi tentang keberadaan suami mereka atau diperintahkan mencari suami mereka di hutan. Domingas Alves Fernandes menceritakan kepada Komisi:

Hari itu [8 Agustus 1983] setiap ibu yang suaminya atau keluarganya melarikan diri, termasuk suami saya, disuruh pergi ke pos ABRI untuk diinterogasi. Kami disuruh mencari suami atau keluarga [kami] di hutan dan berteriak memakai megafon. Sebagian dari kami, 10 atau lebih, pergi ke hutan di belakang [Gunung] Paicão untuk mencari mereka yang lari...Setelah kembali, kami melapor kepada mereka bahwa kami tidak menemukan siapapun. Setiap hari setelah itu, selama beberapa minggu, kami wajib lapor ke kantor.⁵⁷⁵

* Pada 10 Oktober ABRI menangkap sembilan Ratih: Marcos Fernandes, Manuel Victor, Joaquim Fernandes, Joaquim Manuel, José da Costa, Domingos Cunha, Telu-Lara, Januario Monteiro, dan Leopoldo Fernandes. Pada 13 Oktober ABRI menangkap Antônio de Oliveira, Pedro dos Santos, Mário Pinto, Orlando Mendes, José Eurico, dan Antônio da Silva.

484. Para perempuan juga berada dalam posisi yang lemah ketika para laki-laki di desa mereka melakukan pencarian paksa untuk menemukan anggota Resistansi di hutan. Seorang pria Timor-Leste dipaksa oleh komandan Satuan Tugas (Satgas) Tutuala untuk ikut dalam sebuah pencarian para anggota Hansip yang melarikan diri selama satu bulan. Istrinya kemudian disuruh datang ke pos Yonif 641 di Laluna Lopo, Poros, Mehara (Tutuala, Lautém), di mana dia diinterogasi tentang kegiatan klandestin suaminya dan apakah dia pernah bertemu dengan anggota Fretilin. Dia ditahan selama tiga malam. Pada suatu malam dia dicium dan disentuh, namun dia tidak diperkosa. Suami dia dibawa ke Kodim 1629 di Lospalos (Lautém) dan tidak pernah terlihat lagi.⁵⁷⁶

485. Masyarakat Porlamano di Desa Mehara menceritakan kepada Komisi bagaimana anggota keluarga dari para Hansip yang melarikan diri dibawa ke pos militer Yonif 641 dan disiksa, sementara anggota Batalion 641 dan Yonif Linud 100 menghancurkan harta benda mereka.⁵⁷⁷ Para tahanan juga disekap di gedung umum di kota tersebut termasuk gedung sekolah dasar dan gereja.⁵⁷⁸ Anggota Yonif Linud 100 menangkap banyak istri anggota Hansip dan menyekap mereka di rumah-rumah tradisional yang kosong (*uma lulik*).⁵⁷⁹ Mereka kemudian memindahkan mereka ke lapangan desa Porlamano di mana camat Tutuala, T393, berasal dari Timor-Leste, dan komandan T392 melakukan interogasi.⁵⁸⁰

486. Penangkapan secara intensif di sekitar Mehara berlanjut sampai akhir 1983.⁵⁸¹ Masyarakat Herana di Mehara misalnya, menceritakan kepada Komisi bahwa pada November Yonif 641 menangkap sepuluh orang kampung dan menyerahkan mereka ke Yonif Linud 100 dan Yonif 745 untuk dibunuh.⁵⁸²

Kisah Maria*

Kisah Maria menggambarkan dampak hebat pembalasan ABRI atas *levantamento* pada kehidupan keluarga dari orang-orang yang terlibat. Suami Maria serta Hansip dan penduduk sipil di Desa Mehara melarikan diri ke hutan pada 8 Agustus. ABRI menangkap Maria pada 10 Agustus 1983 di Desa Mehara, dua hari setelah *levantamento*. Dia langsung dibawa ke Kodim 1629 Lospalos (Lautém).

Di Kodim, dia diinterogasi oleh militer Indonesia mengenai keberadaan suaminya, berulang-ulang. Dia disekap di sel gelap. Orangtua Maria juga ditahan dan diinterogasi selama 15 hari di Koramil Tutuala. Anak bungsunya yang baru berusia tujuh bulan, dibawa ke Kodim Lospalos dan digantung terbalik dengan kaki diikat selama beberapa jam. Anak ini menjadi sasaran karena dia anak dari suaminya saat itu. (Tiga anak Maria lainnya dari suami pertama.) Selama tiga tahun di penjara

* "Maria" adalah nama samaran, yang digunakan sebagai ganti untuk nama sebenarnya agar melindungi identitas korban.

di Kodim, Maria mengaku berulang kali diperkosa dan mengalami keguguran kehamilan tiga kali. Dia tidak ingin anaknya lahir karena setiap bayi dalam kandungan merupakan hasil perkosaan ABRI dan dia tidak tahu siapa ayahnya. Pada 1986 mereka membebaskan dia dari Kodim, tetapi dia tidak sepenuhnya bebas. Dia wajib lapor seminggu sekali ke militer. Komisi mendengar bahwa pada 1988 dia dipaksa mencari suaminya di hutan bersama anggota Yonif 745 yang membuntuti dia. Ketika suaminya ditemukan, suami Maria ditembak mati oleh tentara. Dengan demikian, wajib lapornya berakhir. Maria meninggal dunia sebelum penulisan Laporan ini.⁵⁸³

Penyiksaan dan penganiayaan

487. Penganiayaan terhadap para tahanan di Distrik Viqueque dan Lautém sangat kejam.⁵⁸⁴ Banyak yang dibunuh atau menghilang seperti yang dibahas dalam Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa. Seperti setelah serangan Marabia dan *levantamento* di Kablaki, meningkatnya laporan tentang penyiksaan dan penganiayaan setelah insiden Kraras tampak seiring dengan meningkatnya jumlah penahanan, yang menunjukkan bahwa sejumlah besar individu yang ditahan sewenang-wenang juga disiksa.

488. Hampir semua tahanan dari Viqueque dan Lautém melaporkan telah dipukuli secara kejam.⁵⁸⁵ Beberapa juga melaporkan telah disundut dengan rokok menyala dan disetrum, yang merupakan bentuk-bentuk penyiksaan yang telah digunakan sejak awal pendudukan Indonesia.

489. Isabel da Silva dari Beaço, Maluru (Viqueque, Viqueque), menggambarkan bagaimana suaminya, Jeremias, kepala sekolah SD desa tersebut, dan saudaranya, Caetano, dibawa oleh seorang anggota Nanggala ke Kodim Viqueque di mana mereka disiksa sebelum mereka menghilang. Camat T256 menemukan bahwa Jeremias telah memberikan buku, bola, dan net kepada teman sekolahnya dulu, Rosito, yang saat itu menjadi anggota Falintil. Isabel menceritakan sebagai berikut:

Suami saya diinterogasi dan disiksa dengan cara dibakar dengan rokok, kakinya ditindih dengan kursi lalu duduk di atasnya, hingga jari kakinya terluka. Suami saya terus menerus dituduh bilang “mata-mata dan kepala dua”. Lalu suami saya Jeremias berkata: “Lebih baik saya dibunuh saja daripada menderitanya.”

Tepat tanggal 28 Maret, Jeremias disuruh masuk dalam tank, alasannya “mau pergi gerakan”. Saya dan suami saya Jeremias sudah tahu bahwa suami saya akan dibunuh, suami saya Jeremias dibawa oleh Nanggala orang Ambon dan Kasi I Viqueque lalu dibawa ke arah Kraras.

Setelah satu minggu, saya kembali lagi ke Kodim Viqueque untuk menanyakan keberadaan suami saya Jeremias. Mereka tertawa dan menyatakan bahwa “tahanan itu masih dalam gerakan.”⁵⁸⁶

490. Orang lain menceritakan tentang penganiayaan yang lebih khusus. Mário de Jesus Sarmento menceritakan kepada Komisi bahwa dia diinterogasi di Carau-Balu oleh Camat T256, serta kepala seksi Intel, T382 [orang Timor]. Kalau dia tidak menjawab pertanyaan mereka, dia ditinju, ditampar, serta disundut dengan rokok. Setelah tiga hari dia dibawa ke Kodim Viqueque oleh empat orang anggota Kodim dan dalam perjalanan mereka memotong telinganya dan memaksanya makan potongan tersebut.⁵⁸⁷ Kejadian tersebut disaksikan oleh Pedro da Costa Amaral yang ditahan pada 19 Agustus oleh delapan anggota Kodim. Pedro sendiri dibawa ke Hotel Flamboyan di Baucau di mana dia disiksa oleh anggota Kopassandha.⁵⁸⁸ Villanova Caetano, setelah dipukuli secara kejam bersama korban Domingos Rodrigues dan Alberto da Incarnação, dipaksa oleh anggota Linud 100 untuk memakan satu bungkus penuh tembakau dan sepasang kaus kaki.⁵⁸⁹

Setelah kejadian *Levantamento*

Pemindahan tahanan keluar wilayah

491. Banyak orang yang ditahan setelah Pemberontakan Kraras dikirim ke Ataúro.⁵⁹⁰ Sebagian lain dipenjara di Indonesia termasuk di Cipinang di Jakarta, dan di Bali.* Komisi mendengar bahwa sekitar 69 orang dilaporkan dikirim ke penjara di Kupang.⁵⁹¹ [Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan penjara di Indonesia, lihat kotak di bawah, setelah paragraf 503.]

Penahanan desa di Lalerek Mutin, Viqueque

492. Penahanan dan pengadilan terhadap penduduk setempat pada 1983 tidak berhenti dengan operasi pembersihan menyusul pemberontakan pada Agustus. Warga sipil yang tersisa di Kraras dipindah ke Desa Lalerek Mutin (Viqueque, Viqueque) dan diawasi ketat sehingga kebebasan fisik mereka sangat terbatas. José Gomes† menggambarkan bagaimana pada pagi hari militer melakukan apel wajib lapor dan pada malam hari para laki-laki dan perempuan dipisahkan. Pos-pos dibangun di sekitar desa dalam tiga lingkaran, konon untuk mencegah warga desa berhubungan dengan para anggota Resistansi. Penduduk desa disuruh menjaga ketiga lapis lingkaran tersebut. Pasukan Nanggala bertugas di lapisan paling dalam. Dengan demikian sebuah tameng manusia raksasa mengelilingi desa tersebut. José Gomes mengatakan bahwa “Lalerek Mutin menyerupai sebuah barak militer.”⁵⁹²

* Marito Reis, seorang pemimpin klandestin di Dili pada 1983, menceritakan kepada Komisi bahwa kebijakan ini berniat untuk memecahkan Resistansi. [Wawancara CAVR dengan Marito Reis, Baucau, 27 Mei 2004.]

† Pada saat Laporan ini ditulis, José Gomes merupakan kepala desa Lalerek-Mutin

Penahanan besar-besaran di Lautém

493. Di Mehara (Tutuala, Lautém) dan Subdistrik Iliomar (Lautém), Komisi mendengar bahwa warga masyarakat ditahan secara besar-besaran pada Desember 1983, empat bulan setelah pemberontakan.

494. Di Iliomar empat deponen menggambarkan bagaimana pada 5 Desember 1983 warga Iliomar dipaksa menghadiri upacara bendera, di mana mereka mendengarkan “kuliah” dan kemudian ditangkap.⁵⁹³ Gabriel da Costa menggambarkan:

Pada hari Senin tanggal 5 Desember 1983, saya berpartisipasi dalam upacara bendera. Setelah selesai upacara, T255, anggota DPRD Iliomar dan T387 serta T213, keduanya anggota Hansip, menyuruh saya dan enam orang teman saya untuk menghadiri pertemuan di kantor kecamatan. Setelah kami masuk, menjelang satu jam, banyak anggota Hansip langsung menutup pintu dan memberikan pengarahan bahwa “Tuhanlah yang menciptakan kita untuk hidup di dalam dunia ini dan Tuhanlah yang menyerahkan kalian, kalian ditangkap karena kalian berkepala dua dan kalian telah melawan pemerintah Indonesia.” Setelah tiga jam kemudian para anggota Hansip membawa kami enam orang ke tempat tahanan yang pada saat itu gedung sekolah yang di sebelahnya dijadikan tempat tahanan.⁵⁹⁴

495. Pada 12 Desember 1983, seminggu setelah penahanan warga sipil di upacara bendera tersebut, José da Costa mengatakan kepada Komisi bahwa semua kepala desa dan kampung di Iliomar diminta datang ke gedung sekolah dasar desa tersebut untuk menghadiri pertemuan. Setelah mereka datang, pintu ditutup dan mereka ditanya: “Apakah kalian yang menginginkan kemerdekaan Timor-Leste?” José menyebutkan nama 20 orang yang ditahan pada saat itu. Mereka dipukuli, ditendang, dan diinterogasi satu per satu. Setelah sepuluh hari Komandan T385 dan T255 membawa sembilan orang tahanan keluar dari gedung tersebut dan mereka dibunuh. Sisa tahanan dipindah ke gedung kecil di sebelah sekolah tersebut selama tiga bulan selanjutnya, di mana mereka diinterogasi setiap hari. Setelah dibebaskan, mereka diminta melapor setiap hari ke Koramil.[†] Banyak warga sipil lain, yang ditangkap setelah kematian kedua anggota Falintil di Iliomar, ditahan di gedung di sebelah sekolah tersebut.⁵⁹⁵ Americo de Sousa Jeronimo menggambarkan bagaimana beberapa tahanan terpaksa tidur di toilet yang penuh dengan kotoran dan air kencing manusia.[‡]

* Mereka adalah António, Jerónimo, José Anunciação, Pelomonte, Joaquim, Martinho Monteiro, Carlos Coreia, Venâncio, Americo Cipriano.

† HRVD Pernyataan 9171 mengatakan bahwa para tahanan disekap di Toko Cina.

‡ Americo da Sousa Jerónimo adalah seorang anggota Fretilin yang sempat ditahan pada 17 Oktober 1983. [Lihat HRVD Pernyataan 3985.]

496. Penangkapan massal lainnya terjadi di Mehara sekitar 16-17 Desember 1983. Camat Tutuala (Lautém), T393, bersama Yonif 641 dan Linud 100, menyuruh seluruh warga Mehara dan desa-desa sekitarnya, seperti Loikere, untuk berkumpul di depan kantor desa Mehara.⁵⁹⁶ Sebuah daftar nama dibacakan dan mereka yang tercantum di dalam daftar tersebut pada awalnya dimasukkan ke klinik Mehara. Kemudian mereka dipindah dengan truk atau helikopter ke Kodim 1629 di Lospalos. Di Kodim, banyak yang diinterogasi tentang *levantamento* di Mehara, ditahan dalam kondisi yang mengenaskan dan disiksa. Salah satu korban menggambarkan bagaimana dia dengan para tahanan lain diikat satu sama lain dan dibawa ke Kodim Lautém 1629, di mana mereka diinterogasi dan disiksa. Cara penyiksaan termasuk pemukulan dan penyetruman.⁵⁹⁷

497. Pada 22 Desember 1983, empat teman Gabriel da Costa dibawa keluar dari sekolah dan dibunuh di wilayah Tirilolo (Iliomar, Lautém) atas perintah komandan Koramil T385, perwira tinggi Kopassandha T386 (keduanya orang Indonesia), T255, dan camat Iliomar T387 (keduanya orang Timor-Leste). Dia dan dua temannya ditahan di sana selama setahun. Mereka dibebaskan pada Hari Sumpah Pemuda, hari besar nasional Indonesia pada 28 Oktober 1984.⁵⁹⁸

498. Sebagian besar dari mereka yang ditahan setelah penangkapan besar-besaran di Mehara pada Desember dilaporkan disekap selama empat sampai tujuh bulan dan setelah itu dikembalikan ke desa masing-masing. Beberapa tahanan dikenakan wajib lapor kepada komando militer lokal. Komisi menerima sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa Kodim Lautém mengeluarkan sebuah "surat perintah" untuk membebaskan para tahanan.⁵⁹⁹

Operasi Keamanan di distrik-distrik lain di Timor-Leste

499. Penelitian Komisi menunjukkan bahwa Operasi Keamanan yang dilancarkan setelah pemberontakan di Viqueque dan Lautém, walaupun memusat di distrik-distrik timur di Timor-Leste, tetap juga mencapai distrik-distrik lain.* Di antara kasus-kasus seperti itu adalah sebagai berikut:

- Dalam satu-satunya pernyataan dari Distrik Ainaro dari akhir 1983, Manuel Agostinho Freitas menceritakan kepada Komisi bahwa dia ditahan di Kota Ainaro pada 10 Oktober oleh Komandan Koramil Zumalai dan seorang Timor-Leste yang camat pada waktu itu. Dia dibawa ke Kodim Ainaro di mana dia dipukuli, ditendang, dan disetrum dengan listrik oleh komandan T377, yaitu komandan yang dilapor melakukan penyiksaan korban setelah

.....
* Komisi tidak menerima pernyataan dari periode Agustus sampai dengan Desember 1983 dari Oecussi, Ermera, Bobonaro, atau Covalima. Satu pernyataan tanpa tercantum bulannya diterima dari Liquiçá yang, seperti di Aileu dan Ainaro, melibatkan Nanggala 55. [HRVD Pernyataan 0205.] Sembilan pernyataan diterima dari Manufahi dari 1983 namun para deponen tidak menyebutkan bulan pelanggaran tersebut terjadi. Dua kasus menggambarkan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan para anggota klandestine: HRVD Pernyataan 5442 dan 5467. Dua pernyataan merujuk kepada keluarga dari mereka yang ditahan karena menampung Komandan Falintil Mau-Hunu, HRVD Pernyataan 5483 dan 5484.

pemberontakan Mau Chiga. Dia disekap di Kodim selama satu bulan dan kemudian diserahkan ke unit 55 Nanggala Kopassandha, yang menyekapnya selama tiga hari. Dia menyatakan bahwa penahanannya merupakan tanggapan atas pembunuhan seorang tentara ABRI oleh Falintil di Nagidal (Zumalai, Covalima).⁶⁰⁰

- Komisi menerima 11 pernyataan sehubungan dengan penahanan di Distrik Baucau pada Agustus dan September 1983.⁶⁰¹ Empat pernyataan menggambarkan tentang penahanan dan penghilangan sekelompok orang di Uma Ana-Iku, Ossoala (Vemasse, Baucau). Enam orang anggota Tim Lorico yang dipimpin oleh T397 memanggil sepuluh orang dari desa tersebut untuk datang ke rumah kepala desa Ossoala.⁶⁰² Di sana anggota Tim Lorico memukul mereka, menendang mereka, serta mengikat tangan mereka di belakang punggung.⁶⁰³ Alice Andre Gusmão, istri dari salah satu tahanan, Alexandre Gusmão, mengatakan bahwa kesepuluh orang tersebut ditahan karena mereka bertemu Xanana Gusmão di Diuk yang terletak di Ossoala. Dia diberitahu bahwa mereka akan dibawa ke Pos Ostico namun mereka tidak pernah kembali (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).⁶⁰⁴
- Lima insiden penahanan sewenang-wenang dilaporkan dari Laleia (Manatuto) namun hanya satu pernyataan yang mencantumkan bulan di mana pelanggaran tersebut terjadi. Agapito Viegas dari Laleia, Manatuto, menceritakan kepada Komisi:

Pada tanggal 11 November 1983 saya mengawasi anak saya sementara istri saya ke pasar ketika tiba-tiba seorang anggota Milsas bernama T398 muncul. Dia menangkap saya dan membawa saya ke Koramil Laleia di mana saya bertemu teman saya Pascoal yang juga ditangkap. Kami disuruh menunggu bus umum ke Manatuto. Sampai di sana, kami diharuskan lapor ke Kodim Manatuto. Dua orang Milsas ikut dengan kami; saya tidak kenal mereka.

Sampai di sana dua anggota ABRI menginterogasi saya. Mereka tanya apa kesalahan saya sampai ditangkap dan saya bilang saya tidak tahu jadi mereka memukul saya dua kali di punggung dengan ikan pari dan lalu memukul saya dengan kayu cendana, satu balok kayu besar...Lalu anggota ABRI lain bernama T399 datang dan bilang: "Apa kamu cukup kuat menahan penyiksaan?" Saya bilang: "Kuat atau tidak, saya harus tahan." Dia tidak suka jawaban ini jadi dia memukul dan menendang saya sampai jatuh.⁶⁰⁵

500. Agapito Viegas mengatakan kepada Komisi bahwa dia kemudian dikirim ke Korem di Dili dan kemudian ke markas Kopassandha di mana dia begitu takut sehingga dia berbohong. Dia mengatakan bahwa dia telah memberikan makanan kepada Falintil. Penyiksaan kemudian berakhir tetapi dia ditahan selama lima bulan di Dili dan dipaksa merapikan rumput di gedung-gedung umum dan sekolah-sekolah.⁶⁰⁶

Aileu 1983

501. Gencatan senjata memberi kesempatan bagi Fretilin/Falintil untuk mendekati masyarakat dan meminta dukungan mereka namun juga mengekspos anggota-anggota jaringan klandestin pada saat “Kontak Damai” antara Fretilin/Falintil dan ABRI. Warga Fatisi (Laulara, Aileu) mengatakan kepada Komisi bahwa sebuah ‘Kontak Damai’ diadakan di desa mereka. Setelah gencatan senjata berhenti, ABRI, Pasukan Khusus, dan berbagai petugas desa melakukan penangkapan terhadap para anggota klandestin di Fatisi.⁶⁰⁷ Pernyataan naratif menunjukkan bahwa 19 orang ditahan sewenang-wenang di Fatisi pada Agustus - September 1983.* Para korban dicurigai melakukan kegiatan klandestin,⁶⁰⁸ khususnya membantu komandan Falintil Sakudi serta dua orang lainnya yang baru ditangkap oleh Yon Marinir 303 dan Nanggala-55.⁶⁰⁹

502. Sebagian besar penangkapan dilakukan dalam sebuah serangan dini hari pada 2 September 1983, walaupun beberapa terjadi pada akhir Agustus. Kelompok yang ditahan pertama-tama dibawa ke pos militer di sebuah kampung di Fatisi, di mana Luis Mouzinho dipukuli dan kemudian dibunuh. Mereka kemudian dibawa ke klinik di Desa Besilau dan diserahkan kepada kepala desa di Besilau yang mengikat mereka dengan kawat. Francisco Pinto de Deus menceritakan bagaimana dengan dikawal oleh Hansip dan Babinsa T400, yang berasal Indonesia, dia berjalan ke sana, masih berdarah akibat pemukulan pada saat penangkapannya. Pada 3 September dua orang tentara dari Kodim Aileu datang dan mengumpulkan para tahanan. Tangan dan kaki mereka diikat dan mereka dibawa dengan truk ke Kodim, kemudian dilempar dari truk seperti karung-karung beras. Prajurit Timor-Leste T401 dan anggota Kodim lain merobek baju mereka dengan pisau hingga mereka telanjang. Dari pukul 22.00 para tahanan dibawa keluar satu per satu untuk interogasi, dan mereka dipukuli dengan balok kayu.

503. Pengalaman para tahanan sejak ini sangat beragam dan menunjukkan ketiadaan koordinasi, pengawasan, dan disiplin di dalam tubuh militer. Pengalaman dari para korban termasuk yang berikut ini:

- Menurut pernyataan Graciano Pinto, saudara laki-lakinya, Moises Sarmento, dibawa pergi pada 30 Agustus 1983 oleh Babinsa T400 (asal Sumatra) dari Besilau, seorang Timor-Leste perwira Intel ABRI bernama T402, Komandan Koramil Laulara, dan camat Laulara. Dia tidak pernah terlihat lagi. Graciano Pinto sendiri melapor bahwa dia ditahan selama tiga tahun dan hanya dibebaskan setelah intervensi dari ICRC.⁶¹⁰
- Alfredo Carvalho juga dibawa secara terpisah ke Besilau dan kemudian setelah beberapa hari dibawa ke suatu makam oleh salah satu anggota

* Nama para korban yang disebutkan kepada Komisi dikumpulkan dari beberapa pernyataan korban, yakni: Alfredo Carvalho, Romaldo Pereira, Joaquim Henrique, Luis Mouzinho, Mariano de Deus, Agostinho Pereira (dikenal juga sebagai Agostinho Martins), Caetano Soares (dikenal juga sebagai Caetano José Alves), Crispin dos Santos, Paulo Soares, Moises Sarmento, Graciano Pinto, António de Deus, Bernardino Santos, Victor Araújo de Deus, Afonso, Ananias, Serafin, dan Francisco Pinto de Deus.

Kopassandha untuk dibunuh. Tapi, ia tidak dibunuh, melainkan dibawa dengan helikopter ke Dili. Malam itu dia dibawa keluar lagi dan diberitahu dia akan dibunuh, tapi, alih-alih dibunuh, dia dibawa ke polisi militer dan ditahan. Dia tidak mengatakan kepada Komisi berapa lama dia ditahan.⁶¹¹

- Seorang Timor-Leste dipukuli dan kemudian diinterogasi di Besilau selama dua hari sebelum akhirnya dibawa ke Koramil Laulara dan diinterogasi oleh komandannya. Karena tidak menemukan apa-apa, Koramil melepas dia.⁶¹²
- Sedikitnya lima dari para tahanan—Crispin Maria dos Santos, João Soares Pereira, Caetano Soares, António de Deus, dan Afonso—dibawa dari Kodim Aileu ke Aissirimou di mana mereka diawasi secara ketat oleh Hansip dan tidak diizinkan mencari makan.⁶¹³ António de Deus dan Afonso meninggal karena kelaparan.
- Komisi telah menerima pernyataan dari seorang pria Timor-Leste bahwa Babinsa T801 memaksanya bekerja di sebuah perusahaan di Aileu selama dua bulan dan mengambil gajinya. Dia kemudian dikirim untuk bekerja dengan Yonif 412.⁶¹⁴

Penjara di Indonesia, 1983 sampai akhir dekade 1990-an

Dari akhir 1983, penguasa Indonesia mulai mengirim kelompok tahanan politik ke penjara-penjara di Indonesia, sering setelah diadili dan dihukum. Penjara-penjara ini termasuk:

Penjara Cipinang di Jakarta, Jawa

Dua gelombang tahanan dikirim ke Cipinang. Gelombang pertama dikirim pada 1984 dalam dua kelompok. Ini termasuk David Dias Ximenes, Mariano Bonaparte Soares, Aquilino Fraga Guterres, Cosme Cabral, Albino de Lourdes, Domingos Seixas, António Mesquita, José Simões, Roberto Seixas, Agapito Rocha, Miguel da Costa, João da Costa, Martinho Pereira, Caetano Guterres, dan Marito Reis.⁶¹⁵ Domingas da Costa dipenjarakan di LP Perempuan Tangerang di Jawa Barat.⁶¹⁶ Kelompok pertama ini dikirim pada Maret - April 1984 dan kelompok kedua, terdiri atas 42 tahanan, pada November - Desember 1984. Pada 1991, hanya tinggal empat tahanan. Pada 1992 ditambah dengan Domingos Barreto, Virgílio Guterres, João Freitas da Camara, Fernando Araújo (La Sama), dan kemudian Xanana Gusmão.⁶¹⁷

Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang di Semarang, Jawa Tengah

Pada 10 Juni 1994, enam orang yang dihukum di Dili setelah demonstrasi Santa Cruz dipindahkan dari Penjara Becora ke Semarang. Mereka adalah Filomeno da Silva Ferreira, Jacinto das Neves Raimundo Alves, Francisco Miranda Branco, Saturnino Belo da Costa, Juvencio de Jesus Martins, dan Gregório da Cunha Saldanha.

Lembaga Pemasyarakatan Lowok Waru Malang di Malang, Jawa Timur

Satu-satunya tahanan yang diketahui Komisi ditahan di Malang adalah José Neves. Dia sebenarnya belajar di Malang saat itu dan ditangkap karena kegiatan klandestin pada 1994.⁶¹⁸

Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok di Surabaya, Jawa Timur

Pada 27 Maret 1997, 16 tahanan dipindahkan dari Penjara Buruma yang terletak dekat Kota Baucau ke Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok. Mereka adalah: João Bosco, Mario Filipe, Marcus Ximenes Belo, Domingos Sarmento, Fortuna Ximenes, Filomeno Freitas, Justino Graciano Freitas, Virgilio Martins, Domingos de Jesus, Domingos de Jesus Freitas, João Freitas, Alexandre Freitas, Muhammad Amin Dagal, Ventura Belo, Marcus Ximenes, dan Albino Freitas.

Kondisi di Indonesia

Penjara Penfui, dekat Kupang, Timor Barat

António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak) mengatakan kepada Komisi bahwa 69 tahanan, termasuk dirinya, merupakan kelompok tahanan pertama yang dikirim ke luar Timor-Leste. Mereka dikirim ke Penjara Penfui di Kupang pada Agustus 1983, diterbangkan dengan pesawat Hercules setelah Pemberontakan Kraras. Mereka ditahan di sana, tanpa diadili sampai Agustus 1984 ketika ICRC mengunjungi penjara dan menyampaikan keluhan tentang keadaan mereka kepada pihak berwenang. Tahanan ditahan dalam keadaan mengenaskan. António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak) mengatakan kepada Komisi:

Selama 14 bulan kami hanya makan daun dan nasi; mereka memberi satu sendok sehari. Biji nasi yang jatuh di tanah kami ambil dan makan. Ada daun di luar; kami menyobek celana kami dan membuat tali dan melempar ke orang dan bilang kepada mereka dalam bahasa Indonesia, “Tolong, apa saja yang ada, bahkan daun seperti yang dimakan kambing, kami perlu semuanya. Semua sisa yang ingin kalian buang, berikan ke kami.” Mereka membawa sisa makanan dalam drum dan melempar ke kita. Tali yang kita buat dari celana kami pakai untuk mengikat daun pepaya dan menarik ke dalam.⁶¹⁹

Menurut António Tomás Amaral da Costa, hanya 14 dari 69 tahanan orang Timor yang ditahan di Kupang bertahan hidup. Dia mengidentifikasi salah satu korban, Duarte Ximenes, yang meninggal karena kelaparan, tapi mengatakan bahwa 54 orang lain diborgol lalu dibawa pergi dengan kendaraan militer dan tidak pernah kembali.⁶²⁰ Ke-14 orang yang selamat dari masa tahanan mereka dikembalikan ke Timor-Leste pada 1985.* Mereka diadili di Benfica,⁶²¹ kemudian menjalani hukumannya di Comarca dan lalu Becora sampai dibebaskan pada 1987.⁶²²

Penjara di Jawa

Setelah itu kelompok-kelompok tahanan baru yang telah diadili dan dihukum dikirim ke Indonesia. Mantan tahanan di penjara Jawa biasanya melaporkan bahwa kondisinya jauh lebih baik daripada penjara di Timor-Leste. Satu mantan tahanan heran diberi tempat tidur dan kasur setelah dia dipindah ke penjara di Jawa. Ini saat dia menyadari bahwa meski ada retorika yang dia dengar di Timor-Leste tentang “satu bangsa”, Indonesia “manggap [kami] warga kelas dua...[dan] memperlakukan kami seperti binatang”.⁶²³ Di LP Semarang pada 1994 dilaporkan tidak ada interogasi dan hukuman para tahanan dikurangi beberapa bulan setiap tahun [remisi].

Alasan mengirim tahanan ke Indonesia

Tidak diketahui mengapa tahanan dikirim keluar Timor-Leste tetapi satu mantan tahanan menyebutkan bahwa Indonesia perlu lebih banyak ruang untuk menahan tahanan orang Timor-Leste.⁶²⁴ Kemungkinannya juga bahwa ini merupakan strategi nyata dan sengaja untuk memisahkan pemimpin klandestin dari jaringan mereka. Kalau ini benar, kebijakan itu tidak berhasil.

Kegiatan Resistansi di penjara Indonesia

Banyak tahanan politik orang Timor yang ditahan di Indonesia mampu melanjutkan kegiatan Resistansi mereka melawan penguasa Indonesia. Dalam beberapa kasus penjara bahkan membantu Resistansi untuk memperluas jaringan komunikasi. Di LP Cipinang, tahanan mampu membangun kembali struktur jaringan klandestin mereka.⁶²⁵ Xanana Gusmão menjelaskan:

Saya memanfaatkan jaringan João Camara yang sudah terbentuk. Karena saya memahami jaringan di hutan dan di kota, saya menulis ke orang-orang di Timor-Leste bahwa saya masih memimpin...

* Menurut António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak), ke-14 orang yang selamat termasuk: dirinya, Fernando da Costa, Rogerio Pinto, Paulo Amaral, Paulo Buikarin, José Goularte, Francisco Ximenes, João Bosco, Ernesto Pinto, Henrique Belmeiro, Mariano Soares, Alfredo da Costa, Augusto da Silva, dan Arthur Kaibada-Waimua. [Wawancara CAVR dengan António Tomás Amaral da Costa, Dili, 28 April 2004.]

perjuangan...[Saya mulai] menggalang hubungan dengan pihak luar. Saat itu Ramos-Horta dan wakil khususnya yang bekerja di LSM dan yang sekarang menjadi istri saya [Kirsty Sword Gusmão] menolong... [A]da Internet dan e-mail yang memungkinkan kami menjalin hubungan dengan dunia luar melalui jaringan yang ada.⁶²⁶

Menurut João Freitas da Camara, tidak sulit bagi orang Timor-Leste di Cipinang untuk melanjutkan kegiatan resistansi mereka karena mereka mendapat dukungan dalam perjuangan mereka dari para penjaga. Banyak penjaga menyukai Xanana dan menghormati dia. Tahanan juga menerima bantuan dari luar berupa mesin ketik, komputer *laptop*, telepon HP, dan video. Mereka memberi uang ke penjaga penjara yang kemudian mengambil barang dan diam-diam memberikannya kepada tahanan. Dengan cara ini mereka bisa terus membuat dokumen.⁶²⁷

Penangkapan anggota pergerakan klandestin perkotaan

504. Pada saat Operasi Sapu Bersih banyak terjadi penangkapan di ibukota, terutama para pemimpin klandestin. Komisi menerima sedikitnya 35 pernyataan berkaitan dengan penahanan sewenang-wenang di Dili antara 9 Agustus dan akhir Desember 1983. 15 laporan lainnya tidak mencantumkan bulan yang pasti. Beberapa tokoh pemimpin di gerakan klandestin mengambil risiko yang tinggi saat itu dengan mendekati tamu dan delegasi asing dan dengan berusaha memberi mereka informasi tentang nasib rakyat Timor-Leste. Pemimpin lain ditahan saat berusaha mengirim informasi ke luar negeri. Beberapa kasus yang berhasil diidentifikasi Komisi termasuk:

- Cândia Gama dan 17 anggota Falintil lainnya ditahan dan dikirim ke Kupang setelah mereka berusaha bicara dengan delegasi anggota parlemen Australia yang dipimpin oleh Bill Morrison. Kebanyakan meninggal akibat kelaparan di Kupang.⁶²⁸
- Justo dos Santos ditangkap di Dili pada 25 Juli 1983 sebelum gencatan senjata berakhir. Dia dibawa ke rumah komandan Korem di Farol (Dili). Di situ dia disekap di sebuah lubang dengan hanya bagian leher di atas tanah. Dia diberi sebungkus lilin yang dia “nyalakan untuk meneranginya di dalam lubang siang dan malam.” Setelah tiga bulan di dalam lubang dia dibawa ke Korem, di mana dia dituduh memimpin gerakan klandestin di Baucau. Selama beberapa malam Minggu secara berurutan, dari Oktober hingga Desember 1983, militer membawa Justo dos Santos ke Tacitolu di pinggir Kota Dili. Dia dikubur sampai ke leher di Tacitolu sebanyak tiga kali.⁶²⁹
- Caetano Guterres adalah anggota klandestin yang ditahan di Dili pada September 1983 oleh Kopassandha setelah anggota klandestin lain yang ditahan menyebutkan namanya kepada militer. Caetano disekap tanpa ada komunikasi

di markas SGI Colmera (Dili) selama tiga bulan. Dia mengatakan kepada Komisi bahwa dia diinterogasi setiap malam, khususnya tentang rencana dan kegiatan Komite Sentral Fretilin. Interogasinya berlangsung selama empat sampai delapan jam per hari dan hampir sepuluh jam antara pukul 19.00 dan pukul 05.00 pada bulan pertama.⁶³⁰ Dia kemudian dibawa ke Comarca dan diadili. Setelah dijatuhi hukuman penjara selama delapan tahun, dia kemudian dipindah ke Cipinang, tempat dia ditahan sampai 1989.⁶³¹

- Marito Reis, seorang pemimpin klandestin, menggambarkan bagaimana pada Agustus 1983, Kopassandha mengirim dia dan 10 orang anggota jaringan klandestin Dili ke Bali untuk diinterogasi. Mereka tidak disiksa namun hanya mendapat satu kali makan setiap hari. Ketika mereka kembali pada November 1983, mereka ditahan di Comarca di mana mereka menerima setrum listrik pada saat interogasi. Marito Reis kemudian ditahan di markas SGI selama empat bulan dan kemudian di Kodim selama sebulan sebelum dikembalikan ke Comarca. Dia tidak disiksa baik di markas SGI atau di Kodim. Bahkan di markas besar SGI seorang Kapten melarang anakbuahnya memukuli Marito Reis sambil berkata: “Dia manusia, bukan binatang.” Pada 1984 Marito Reis disidangkan dan dihukum. Dia bagian dari sekelompok tahanan politik yang dikirim ke LP Cipinang di Jakarta untuk menjalani hukumannya.
- Pada kesempatan lain Marito Reis dan lima orang anggota klandestin lain dipanggil ke Korem di mana mereka dipaksa menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan: “Apabila kalian tetap melakukan kegiatan klandestin, maka kalian semua akan ditembak di tempat.”⁶³²

505. Jelas pihak militer Indonesia memulai mengakui pentingnya gerakan klandestin perkotaan, yang makin terorganisasi, dalam perjuangan Resistansi. Penahanan bertahun-tahun terhadap orang yang dicurigai sebagai pemimpin klandestin, bahkan membunuh mereka dalam kasus tertentu, merupakan strategi utama militer untuk mengatasi perkembangan ini. Selain rakyat yang ditahan setelah serangan Marabia pada 1980, jumlah anggota klandestin perkotaan yang dikirim ke Atauro sedikit sekali. Alih-alih, mereka diadili dan divonis dengan hukuman penjara untuk masa yang panjang, sering sebagiannya di Indonesia. Pengalaman para anggota klandestin perkotaan menunjukkan bahwa militer Indonesia memiliki intelijen yang lebih terperinci dan sistem yang lebih terkoordinasi untuk menangani tahanan politik di Timor-Leste dalam periode ini.

506. Caetano Guterres yang ditunjuk oleh Xanana Gusmão sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyelundupkan informasi tentang Timor-Leste ke luar negeri, menceritakan kepada Komisi tentang dokumen-dokumen yang berhasil dia kirim dari Timor-Leste lewat seorang wartawan yang meliput kunjungan delegasi parlemen Australia pada Juli 1983.⁶³³ Di antara dokumen tersebut terdapat sebuah pedoman memerangi pemberontak yang disiapkan oleh pihak militer Indonesia bagi pasukannya dan ditandai ‘Rahasia’. Falintil berhasil merampas pedoman tersebut dari barak tentara Indonesia. Komisi mendapatkan dokumen yang ditandatangani oleh Kol. A. Sahala Rajagukguk yang menjabat sebagai Komandan militer di Timor-Leste, menyatakan:

Diharapkan bahwa kekerasan tidak digunakan, kecuali dalam situasi-situasi tertentu di mana orang yang diinterogasi sulit untuk mengatakan yang sebenarnya...Jika anda terpaksa menggunakan kekerasan, tidak boleh ada masyarakat umum yang menyaksikan...Hindari pengambilan foto-foto yang menunjukkan penyiksaan (ketika sedang disetrum, ditelanjangi, dll.)⁶³⁴

Penangkapan dan interogasi di Dili akhir 1983

Aquilino Fraga Guterres (Ete Uko) adalah anggota klandestin yang terlibat pengiriman informasi mengenai situasi di Timor-Leste ke luar negeri. Pada Oktober 1983 Kodim Dili menguak kegiatannya dan memerintahkan dua petugas Intel, Domingos dan Carlos, menyelidiki dia. Saat itu Aquilino bekerja sebagai sopir di Bank Pembangunan Daerah, BPD.

Aku juga tidak menyangka kalau para anggota SGI dan direktur BPD menjebak saya...Tiba-tiba aku disuruh direktur untuk membawa mobil ke bengkel yang terletak di Kantor Sosial. Setelah aku tiba di bengkel tidak lama kemudian muncul beberapa orang anggota SGI yang tidak diketahui identitasnya...dan mereka mengatakan sambil berbohong kepada saya, "Direktur menyuruh Anda dan kami [SGI] untuk menjemput tamu di bandara". Aku juga mengikuti kemauan mereka. Setelah aku berada di dalam mobil mereka, aku dibawa keliling Balide, Korem, hingga SGI Colmera.

Di markas besar SGI anggota Kopassus menginterogasi Aquilino. Dia ditahan selama satu tahun dan selama penahanannya dia dipukuli dan disetrum:

Pertama mereka menghancurkan fisik saya. Contohnya, dalam hal makanan tidak seperti biasanya, tetapi porsinya hanya sedikit selama satu tahun. Setelah menjalani masa-masa sulit, aku kemudian diinterogasi "Dala hira halo enkontro ho Falintil? Ajuda saida deit o fo ba Falintil?"["Berapa kali kamu ketemu dengan Falintil? Dukungan apa yang kamu berikan kepada Falintil?"] Dalam interogasi tersebut aku juga dipukul dengan senjata, kaki saya ditindih dengan kursi, aku disetrum dengan listrik. Saya merasa seperti sekarat. Mereka mengikat seluruh tubuh saya dengan tali kemudian mata saya ditutup dengan kain, selanjutnya dibuang ke atas mobil entah mau dibawa ke mana. Aku hanya bisa merasa dan mendengar lewat telinga. Selama empat jam aku dibawa keliling kota Dili. Setelah mereka merasa puas dan capek aku dibawa kembali ke SGI Colmera.

Setelah ini, dia dipindah ke Penjara Comarca, di mana dia dibiarkan tanpa pakaian. Dia ditahan bersama sekitar 20-30 orang dalam satu sel. Kalau mereka ingin menginterogasi dia, dia dibawa kembali ke SGI Colmera lagi dan kemudian dikembalikan ke Comarca setelah interogasi. Aquilino menjelaskan bahwa selama interogasi, petugas hanya ingin pengakuan:

Dalam waktu interogasi mereka bukannya mau mengetahui tentang kesalahan aku, melainkan kesalahan itu Kopassus sudah rancang dan memaksa saya untuk mengakunya. Misalnya bahwa kita mengirim amunisi, supermi, baterai [kepada para pejuang Resistansi]. Mereka bilang: “Kalau kalian mengaku seperti itu maka Anda akan mengikuti sidang dan cepat dibebaskan”. Hal itu sangat bertentangan dengan batin aku, sehingga aku tidak mengikuti keinginan mereka. Waktu itu juga mereka menggunakan sistem, siapa yang berhasil membunuh atau menyiksa orang maka dia akan naik pangkat atau dapat bonus.⁶³⁵

Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan pada 1984

507. Penelitian Komisi menunjukkan bahwa 1984 adalah awal dari menurunnya penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan. Setelah 1984, dimulailah periode yang secara relatif dapat dipandang sebagai periode ‘normalisasi’ atau ‘konsolidasi’ (1985-1998).

508. Walaupun demikian, tahun tersebut dimulai dengan sebuah operasi militer di Subdistrik Zumalai (Covalima). Sejumlah orang ditahan dan beberapa tewas dalam penahanan. Setelah sebuah serangan yang mematikan oleh Falintil terhadap personel militer Indonesia di Subdistrik Zumalai (Covalima) pada akhir 1983,⁶³⁶ personel militer Indonesia dari Distrik Bobonaro menangkap orang-orang di Subdistrik Bobonaro maupun Subdistrik Zumalai (Covalima) yang bersebelahan serta mungkin juga sampai dengan Distrik Ainaro. Beberapa tahanan disekap di Koramil Bobonaro,⁶³⁶ sebagian lagi di Koramil Zumalai.⁶³⁷ Baik laki-laki maupun perempuan ditahan secara sewenang-wenang, kadang-kadang hanya karena nama mereka mirip dengan nama orang yang dicurigai militer membantu Resistansi.⁶³⁸

509. Armando dos Santos, salah satu yang ditahan, memperkirakan sekitar 100 orang ditahan di Koramil Bobonaro bersama dia. Melalui proses pengambilan pernyataan,

.....
* Olandino Guterres mengatakan kepada Komisi bahwa penyerangan terjadi pada 7 Desember 1983 (ulang tahun peringatan invasi Indonesia di Dili) dan bahwa Falintil membunuh tujuh anggota Yonif 407 di Pelet, Lour (Bobonaro, Bobonaro). Yonif 407 sedang patroli saat disergap Falintil. Komisi tidak bisa memastikan cerita ini tetapi mencatat bahwa ketiga pernyataan yang diterima dari korban penahanan sewenang-wenang di sekitar Pelet memberi tanggal penangkapan mereka antara Maret dan Juli 1984. Dua dari pernyataan ini berasal dari istri para korban yang dibunuh di Koramil Zumalai. Alasan yang mereka berikan untuk penahanan ialah suami mereka menyembunyikan bendera Fretilin.

Komisi telah mengidentifikasi setidaknya 15 orang dari sekitar wilayah Zumalai dan Subdistrik Bobonaro.* Seorang saksi lain menyerahkan kepada Komisi sebuah daftar dengan nama 45 orang yang ditahan kemudian dibunuh dalam operasi tersebut.⁶³⁹ Enam orang korban ditangkap di Desa Carabau (Bobonaro, Bobonaro) pada Februari 1984 sehubungan dengan serangan tersebut. Informasi yang diberikan kepada militer oleh warga masyarakat lain, yang menyatakan mereka anggota Fretilin atau mempunyai kontak dengan Fretilin/Falintil, berujung pada penangkapan tersebut.† Jelas, militer telah mengadakan penyelidikan setelah serangan pada akhir 1983 untuk mengidentifikasi anggota Fretilin dan klandestin di wilayah tersebut sebelum melakukan penangkapan. Penangkapan anggota Fretilin maupun orang yang dicurigai sebagai anggota Fretilin di Subdistrik Bobonaro dan Subdistrik Zumalai berlanjut sampai Agustus 1984.⁶⁴⁰ Dinis de Araújo mengatakan kepada Komisi:

Suatu hari anak perempuan saya sakit dan saya merawat dia. Tibatiba, ABRI membawa empat orang di depan rumah saya, semua terikat. Saya lihat sebagian besar dari mereka telah terbakar. Mereka seperti ubi bakar, badan mereka penuh tanda-tanda hitam dan gelap di tubuh dan wajah. Rambut saya berdiri dan saya dipenuhi rasa takut. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa kepada saya. Mereka hanya berjalan lewat depan rumah. Mungkin, mereka sudah punya nama saya. Setelah satu bulan, seorang Hansip dari Bobonaro datang ke rumah dan menangkap saya.⁶⁴¹

510. Seluruh tahanan yang diidentifikasi oleh Komisi melaporkan penyiksaan dan penganiayaan. Miguel dos Santos ditangkap di Hauba (Bobonaro, Bobonaro) pada 7 Februari oleh Yonif 407 dan dibawa ke kantor desa Carabau sebelum dibawa ke Koramil Bobonaro:

Yonif 407 mulai interogasi. Mereka tuduh saya begini: "Kamu dengan GPK/Falintil menembak pasukan di Fatuleto/Zumalai." Lalu seorang Timor Timur, T403, mantan kepala desa Oeleu bersama dengan ABRI, mulai memukul, menendang, meninju, dan membakar saya, dengan korek dan rokok. Badan saya sakit semua dan muka saya bengkak. Darah mengalir dari hidung, mulut, dan mata saya.⁶⁴²

511. Para tahanan kadang-kadang dipaksa telanjang bulat sambil diinterogasi mengenai pembunuhan tentara Indonesia. Komisi juga telah menerima laporan bahwa para tahanan diancam, disiram dengan minyak, dan dibakar hidup-hidup. Mereka tidak diberi makan sampai selama satu minggu. Perwira Kopassandha,

* Mereka adalah: Armindo Franquelin, Alarico Sena, Francisco Talo Mau, António Gomes, Afonso da Cruz, Manuel Freitas, Matias, Miguel dos Santos, José Noronha, Rozito dos Santos, Carlos Magno, José Cardoso, Agapito Moniz, dan Belarmino dos Santos.

† Sebagai contoh, António Gomes mengatakan kepada Komisi bahwa dia ditahan oleh Yonif 407, Kopassandha, dan anggota Koramil Bobonaro berdasar "informasi" dari lima orang di desa tersebut: T404, T405, T406, T407, T408. Pernyataan HRVD 5156.

kemungkinan besar dari Chandraca 11, terlibat dalam banyak pemukulan ini, walau kadang Hansip berpartisipasi atas perintah perwira Kopassandha. Komisi memastikan bahwa sedikitnya tiga orang tahanan tewas dalam penahanan, tetapi mungkin lebih banyak. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.) Para tahanan yang hidup kemudian dipindahkan ke Halecou di Desa Ritabou (Maliana, Bobonaro) pada Mei 1984.⁶⁴³

512. Dalam kasus-kasus penahanan sewenang-wenang lainnya pada 1984, korban ditangkap karena dicurigai memberikan bantuan material kepada Falintil, melakukan kontak dengan para pemimpin Falintil, mengetahui tentang rencana penyerangan Falintil, atau mempunyai anggota keluarga di hutan.⁶⁴⁴ Satu deponen, Sama Leto, mengatakan bahwa dia ditangkap oleh Yonif 412 dan juga Kopassandha 55, karena mereka menemukan foto adik laki-laknya yang masih di hutan dan karena dia kepala desa tetapi menolak menyediakan perempuan untuk militer. Dia memberitahu kepada Komisi:

Saya ditangkap dan dibawa ke Tokoluli untuk menggali lubang saya sendiri dan kemudian saya akan dibunuh. Tetapi tidak jadi dan saya dibawa pulang kembali. Dua hari kemudian saya dipanggil lagi. Saya dipukuli sampai semua gigi saya tanggal. Saya perdarahan dan wajah saya bengkak. Lalu saya dibawa ke Liquiçá di mana saya ditahan bersama teman saya Domingos [selama dua minggu]. Saya ditahan lalu saya dibawa ke Bazartete [Liquiçá] selama satu hari, kemudian dibebaskan karena saya menyumbang satu ekor kambing untuk pesta perpisahan Yonif 412 dan Kopassandha 55.⁶⁴⁵

513. Beberapa orang kurang beruntung tertangkap dalam serangan-serangan Falintil dan kemudian pihak tentara Indonesia mencurigai mereka telah bekerjasama dengan para penyerang. Adriana Soares menggambarkan kejadian setelah Falintil merampok kios kakaknya, Manuel Gaspar di Uaitame (Uatolari, Viqueque) pada April 1984. Adriana menyatakan bahwa setelah perampokan tersebut, seseorang di desanya melaporkan dirinya dan Manuel ke komandan Chandraca 7 (Kopassandha) dan kemudian mereka ditangkap. Adriana diinterogasi dan disiksa bersama seorang perempuan muda lainnya, Angelina. Dia menceritakan kepada Komisi:

Saya dan Angelina dimasukkan ke dalam kamar, kemudian pakaian kami dirobek hingga kami telanjang, lalu disuruh duduk di atas kursi baru diinterogasi. “Bilang kalian berdua yang kontak dengan Falintil ya! Bertemu dengan Xanana dan komandan Rosito!” Lalu anggota Nanggala itu berdiri pukul hingga saya jatuh dan anggota Nanggala itu bilang lagi, “Xanana dan komandan Rosito cuki kalian berdua ya!” Kami hanya diam saja. Mulai saya dan Angelina disulut dengan rokok pada badan dan paha kami, tapi mereka tidak perkosa kami. Bulan Mei, TNI datang jam 5 pagi mengeluarkan 18 orang laki-laki yang ditahan itu, bawa dengan mobil Hino. Hingga sekarang kami keluarga tidak tahu keberadaannya.⁶⁴⁶

Penahanan dan penyiksaan oleh penguasa pendudukan Indonesia 1985-1998

Pendahuluan

514. Selama periode 14 tahun dari 1985 sampai 1998, yang juga dikenal sebagai periode ‘normalisasi dan konsolidasi’, Timor-Leste seolah-olah menjadi seperti layaknya provinsi lainnya di Indonesia dan dibuka untuk dunia luar.⁶⁴⁷ Penelitian Komisi menunjukkan bahwa penahanan sewenang-wenang, penganiayaan, dan penyiksaan warga sipil pada masa itu lebih rendah dibandingkan dalam periode 1975–1983, walaupun terus terjadi setiap tahun pada periode tersebut.

515. Pergeseran dan perubahan politik yang signifikan baik pada sifat pendudukan maupun sifat perlawanan terjadi dari tahun 1985 sampai 1998. Pada 1987 Falintil memisahkan diri dari partai Fretilin dan menjadi gerakan Resistansi bersenjata nonpartisan (lihat Bagian 3: Sejarah konflik, dan Bagian 5: Resistansi: Struktur dan strategi). Karena terputus dari dunia luar, Falintil menjadi semakin bergantung pada front klandestin untuk dapat bertahan hidup dan terus melanjutkan kegiatan Resistansi. Bila masa-masa awal diwarnai oleh bentrokan bersenjata dari pihak Resistansi dengan dukungan jaringan klandestin, pada akhir 1980-an Resistansi pada umumnya berlangsung di kota-kota, melalui kegiatan demonstrasi dan bentuk-bentuk aktivisme politik lain. Generasi baru aktivis muda menjadi pemimpin gerakan klandestin kota. Mereka terus diberi arahan oleh pemimpin-pemimpin Falintil dari hutan (lihat Bagian 5: Resistansi: Struktur dan strategi).

516. Walaupun para tokoh Resistansi terus ditahan dan penggunaan penyiksaan dalam penahanan sebenarnya meningkat, namun militer Indonesia menjadi semakin kurang tampak sebagai pelaku dari pelanggaran-pelanggaran ini. Polisi mengambil alih sebagian tanggung jawab untuk keamanan wilayah ini. Para anggota Falintil dan jaringan klandestin yang tertangkap ada yang didakwa dan diadili (lihat Bab 7.6: Pengadilan politik). Di awal tahun 1990-an militer mulai membentuk paramiliter lokal dan pemuda-milisi yang bertanggung jawab atas banyak pelanggaran yang terjadi. Politisasi dari Resistansi dan pemuda pro-Indonesia mendorong munculnya keresahan sipil seputar isu agama dan etnik. Ketegangan ini, dalam beberapa kesempatan, berakhir pada kekerasan antara pemuda Timor-Leste dengan aparat keamanan Indonesia (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

517. Pola-pola yang telah ada sebelumnya terus berlanjut. Perburuan anggota Resistansi bersenjata dan gerakan klandestin terus berlangsung. Mereka yang ketahuan kemudian ditangkap dan ditahan sewenang-wenang serta mengalami penyiksaan atau perlakuan kejam dan tidak berperikemanusiaan lain. Penyerangan oleh Resistansi bersenjata ke sasaran-sasaran militer dan sipil juga terus berlanjut, walaupun terjadi dalam skala yang lebih kecil dibandingkan pada awal 1980-an. Namun tidak berbeda dengan awal 1980-an, penduduk sipil mengalami berbagai bentuk kekerasan setelah penyerangan-penyerangan tersebut. Penyiksaan tetap menjadi pengalaman yang biasa pada saat interogasi dan kondisi penahanan juga

sering amat buruk. Jumlah penahanan dan kejadian penyiksaan dan penganiayaan tidak banyak berubah selama periode yang panjang dan pelik ini. Sub-bagian ini disusun menurut alasan-alasan umum bagi penahanan ketimbang secara kronologis. Kriterianya antara lain:

- Keterlibatan dalam, atau hubungan dengan, gerakan klandestin atau Resistansi bersenjata
- Keterlibatan dalam demonstrasi publik menentang penguasa pendudukan
- Keterlibatan dalam masalah agama atau konflik yang lain
- Penahanan dalam rangka pencarian anggota Falintil
- Penyerangan oleh Resistansi terhadap target militer atau sipil Indonesia

Profil pelanggaran

518. Periode 'normalisasi dan konsolidasi' pendudukan Indonesia antara 1985 sampai 1988 ditandai dengan perbedaan mendasar dalam pola penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan dibandingkan dengan periode-periode lain (yaitu periode 1974-1979, 1980-1984, dan yang terakhir periode selama Jajak Pendapat PBB 1999). Secara khusus, tingkat kekerasan secara keseluruhan lebih rendah antara 1985 dan 1998 daripada selama periode lainnya. Hipotesa ini didukung oleh temuan kuantitatif Komisi. Pertimbangan mengenai besaran keseluruhan kekerasan-kekerasan yang terdokumentasi menunjukkan bahwa meskipun periode ini mencakup 53,8% (14/26) dari tahun-tahun yang menjadi mandat Komisi, hanya 23,8% (6.039/25.383) dari penahanan, 30,5% (3.393/11.135) dari penyiksaan, dan 27,1% (2.292/8.443) dari penganiayaan yang dilaporkan kepada Komisi muncul selama periode ini.

519. Bukti-bukti selanjutnya dapat ditemukan dengan melihat pada rata-rata kekerasan harian. Rata-rata kekerasan per hari untuk penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan, jauh lebih rendah selama periode ini dibanding periode-periode lainnya, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, kekerapan penahanan per hari yang didokumentasi Komisi untuk 1999 lebih tinggi 7,9 kali pada 1999 dan 3,8 kali lebih tinggi pada tahun-tahun awal invasi daripada selama fase 'normalisasi dan konsolidasi'.

Tabel 7: Rata-rata kekerasan harian untuk penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan selama fase 1974-1999

| Periode | Penahanan | Penyiksaan | Penganiayaan | Total |
|--------------|-----------|------------|--------------|-------|
| 1974 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| 1975-1984 | 4,5 | 1,5 | 1,1 | 7,1 |
| 1985-1998 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 2,3 |
| 1999 | 9,3 | 7,5 | 7 | 23,8 |
| Tahun mandat | 2,7 | 1,2 | 0,9 | 4,8 |

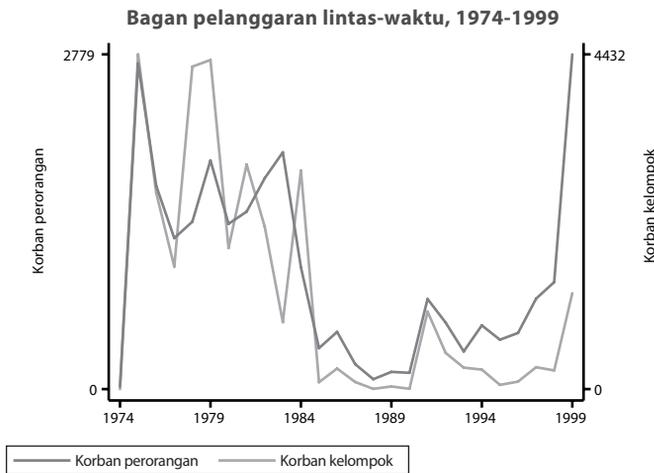
Sumber: Database narasi pernyataan yang diberikan kepada CAVR (HRVD)

Pelanggaran lintas-ruang

520. Selain Pembantaian Santa Cruz dan periode setelahnya pada 1991 di Dili dan daerah-daerah sekitarnya, kekerasan yang dilaporkan selama ‘tahun-tahun konsolidasi’ dari 1985 sampai 1998 mengambil bentuk kekerasan sporadis berskala rendah di ketiga wilayah. Komisi mendokumentasi tingkat penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang relatif sama selama fase ‘normalisasi dan konsolidasi’ di daerah-daerah barat dan timur dan tingkatan yang agak tinggi di daerah-daerah tengah selama periode ini. Hal ini tampaknya sejalan dengan kenyataan bahwa pusat-pusat penahanan utama militer Indonesia berada di Dili.

Penahanan dan penyiksaan

521. Selama periode 1985-1998, lebih banyak orang ditahan sebagai individu daripada sebagai kelompok-kelompok, sebagaimana dapat dilihat dalam bagan di bawah ini. Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa praktik-praktik penahanan oleh penguasa Indonesia bergeser fokusnya dari penahanan baik terhadap individu maupun terhadap kelompok pada tahun-tahun awal pendudukan 1977-1984, kepada sebuah strategi yang lebih bersasaran pada individu-individu dari 1985 sampai 1999. Hal ini juga menunjukkan berakhirnya pemindahan massal warga sipil ke kamp-kamp penahanan seperti di Atauro pada awal periode ini.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

522. Jenis kekerasan yang lebih bersasaran dari militer Indonesia didukung bukti statistik Komisi: koefisien korelasi antara penahanan dan penyiksaan yang terdokumentasi yang dilakukan oleh militer Indonesia selama ‘fase normalisasi dan konsolidasi’ adalah 0,97. Secara khusus, sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini, tingkatan relatif penyiksaan per penahanan meningkat secara pesat selama ketiga fase konflik: dari 0.29 pada tahun-tahun awal invasi, menjadi 0.52 pada tahun-tahun normalisasi dan konsolidasi, dan 0.69 selama 1999.

Tabel 8: Rasio penyiksaan per penahanan yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia yang dilaporkan selama periode 1974-1999

| Periode | Penahanan | Penyiksaan | Rasio penyiksaan per penahanan |
|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1975-1984 | 10.867 | 3.237 | 3,4 |
| 1985-1998 | 5.465 | 2.921 | 1,9 |
| 1999 | 1.417 | 972 | 1,5 |
| Total | 17.749 | 7.130 | 2,5 |

Afiliasi pelaku

523. Institusi yang disebut bertanggung jawab atas penahanan dan penyiksaan juga berubah pada periode ini. Keterlibatan Hansip jauh menurun pada 1984 setelah pemberontakan-pemberontakan Hansip pada 1983 dan lebih jauh lagi menurun pada 1985. Jumlah kasus penahanan yang melibatkan polisi juga menurun pada tahap-tahap awal antara 1985 dan 1990, tetapi sejak 1991 keterlibatan polisi meningkat sampai kepolisian menjadi salah satu institusi utama yang melakukan penangkapan. Militer Indonesia tetap merupakan pelaku yang paling sering disebut dalam kasus-kasus yang terdokumentasi sepanjang periode ini.

Penahanan para anggota klandestin

524. Pada 1985, penguasa Indonesia yakin bahwa Operasi Persatuan telah berhasil menghancurkan sebagian besar jaringan klandestin yang menopang kelangsungan perlawanan bersenjata Falintil dan bahwa jumlah Falintil semakin menciut. Resistansi bersenjata juga mulai mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati dalam perjuangannya. Strategi Resistansi bergeser selama tahun 1980-an ke titik di mana konflik bersenjata menjadi prioritas kedua setelah perjuangan diplomasi internasional, dan secara umum tidak mencari konfrontasi langsung berskala besar dengan militer Indonesia (lihat Bagian 5: Resistansi: Struktur dan strategi). Walau demikian, jaringan klandestin menjadi semakin terorganisasi dan banyak dari mereka ditempatkan di bawah kendali struktur sentral pada 1986, Organisasi Koordinasi Interregional (Organização Coordenadora Inter-Regional, atau OCR).^{*} Mereka juga mulai mengincar sekolah dan kelompok pemuda untuk merekrut anggota. Proses organisasi dan sentralisasi ini berlanjut pada 1990-an. Para pemimpin jaringan ini menjadi target utama militer Indonesia.

525. Salah satu ciri utama periode ini adalah bahwa gerakan klandestin semakin banyak dipimpin oleh pemuda dan organisasi pemuda. Mereka mengadakan protes politik terbuka melawan kekuasaan pendudukan yang lebih lanjut dibahas di bawah.

^{*} Menurut Vasco da Gama, António Tomás Amaral da Costa [Aitahan Matak] dan Paulo Assis Belo aktif dalam organisasi ini. Organisasi ini berjalan sampai 1988. (CAVR, Wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004)

Penahanan dan interogasi anggota klandestin sesungguhnya, atau orang-orang yang dicurigai sebagai anggota klandestin yang tidak terlibat dalam demonstrasi, berlanjut selama periode ini di semua distrik di Timor-Leste termasuk Dili. Komisi menerima lebih daripada 500 laporan penahanan, penganiayaan, atau penyiksaan anggota klandestin pada periode ini. Tahanan klandestin sering mengalami penyiksaan dan penganiayaan pada waktu ditangkap atau pada saat ditahan.

1985-1998

526. Pada periode ini, Timor-Leste masih tertutup dari dunia luar. Komunitas-komunitas masih dikendalikan secara ketat oleh jaringan intelijen komunitas yang luas dan kehadiran pasukan pendudukan yang merasuk sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Tetangga melaporkan tetangga. Militer dan polisi bertindak tanpa takut hukum dan dengan sebeb-bebasnya memperlakukan orang-orang yang dicurigai sebagai anggota klandestin semau mereka (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

527. Dalam sebuah kasus, Komisi mendengar kesaksian tentang Pasukan Khusus (Kopassandha-Komando Pasukan Sandi Yudha) menahan beberapa orang di Distrik Lautém pada 23 Mei 1985 dan menyiksa serta menganiaya mereka. Armindo Nunes (17) menggambarkan bagaimana dia dan dua teman lainnya, Augusto da Silva (18) dan Amelio Nunes (17), semuanya anggota klandestin, ditangkap di SMA tempat mereka bersekolah di Lospalos (Lautém). Mereka dibawa ke markas Kopassandha di mana mereka ditahan, dipukuli, ditampar, dan ditendang. Ketiganya kemudian dibawa ke Kodim Lospalos di mana mereka ditahan bersama-sama dengan anggota-anggota Fretilin, Domingos Savio, yang dalam keadaan terluka karena tertembak sebelumnya. Setelah mereka di Kodim dua hari dua malam, pasukan Batalion Infanteri Lintas Udara (Yonif Linud) 700 datang dan menyiksa mereka. Armindo Nunes mengatakan kepada Komisi:

Malam itu mereka [Yonif Linud 700] datang dan memukuli kami dengan meninju kami di kepala dan menendang kami di lutut. Hal ini terjadi tiap malam selama tujuh hari. Mereka hanya memukuli kami dan tidak mengeluarkan sepatah katapun. Lalu pada pagi harinya kami disiram dengan air dan kami dibiarkan basah begitu saja. Setelah tujuh hari saya dipanggil oleh seorang anggota Kopassandha lalu dia meninju kuku-kuku kaki saya dengan kursi sambil duduk di atas kursi tersebut. Seorang anggota Tim Alfa datang dan mengancam akan membunuh kami jika kami tidak berhenti memperjuangkan kemerdekaan. Saya diinterogasi empat kali selama masa penahanan saya dan setiap kali saya dipukuli dengan cara yang sama, yaitu ditinju di bagian kepala. Kepala saya mulai terasa berat dan saya tidak bisa menjawab pertanyaan mereka.⁶⁴⁸

528. Selama tujuh hari para tahanan tidak diberikan makanan dan tidak bisa menahan lapar; mereka memakan kulit pisang yang telah dibuang. Amelio Nunes dibebaskan tapi tahanan yang baru tiba di Kodim, termasuk Victor, José, Angelo, Martino, dan Manuel Xisto. Mereka semua dipukuli secara rutin. Pada Agustus, Armindo Nunes dipindahkan ke markas Polres selama sebulan. Pada 14 September 1985 ia dibawa

dengan helikopter bersama lima orang lainnya ke Penjara Balide di Dili untuk menyelidiki di mana ia dibiarkan telanjang di dalam sebuah sel gelap selama kurang-lebih 15 hari dan ia dibiarkan tidur di lantai. Pada akhirnya, dia disidangkan lima bulan kemudian dan dihukum penjara selama satu tahun sepuluh bulan.⁶⁴⁹

529. Contoh-contoh lain dari penahanan sewenang-wenang sejak bagian awal periode ini antara lain:

| Nama | Distrik | Penangkapan | Alasan Penangkapan | Penahanan | Penyiksaan/penganiayaan |
|---|------------------|---|--|--|--|
| Moises de Jesus dan Domingos ⁶⁵⁰ | Ainaro | 25 Januari 1985 oleh Hansip T409 dan T410 dan seorang anggota Kopassus. | Dicurigai merampas senapan dari Koramil dan memberikannya ke Falintil. | Ditahan di Koramil Ainaro selama dua hari. | Dipukuli tanpa henti. |
| Ildefonso Piedade Belo ⁶⁵¹ | Baucau | 17 September 1985 oleh Komandan Batalion Infanteri [Yonif] 724, T411. | Dicurigai mengetahui tempat penyimpanan senjata Falintil. | Ditahan di Hotel Flamboyan di Baucau, diinterogasi oleh komandan ABRI, T412 selama dua hari dua malam. | Dipukuli, disengat listrik, disundut rokok, dibenamkan di tangki air berkali-kali oleh Komandan ABRI, T413. |
| António de Araújo Soares ⁶⁵² | Makadade, Dili | 1985 oleh Ketua RW | Masyarakat diperintah untuk menarik kapal sepanjang pantai. Korban menolak bergabung dan dituduh mendukung Fretilin. | Dibawa ke rumah kepala desa. | Tidak ada laporan tentang penyiksaan |
| Raimundo da Cruz ⁶⁵³ | Viqueque | 1985 oleh Komandan Kopassus, T414 | Seorang tetangga kehilangan sapi dan menuduh korban mencuri untuk Falintil. | Ditahan selama tiga bulan. | Dipukuli, ditinju, dan ditendang. |
| Herculano dos Santos ⁶⁵⁴ | Hatolia, Ermera | April 1986 oleh Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), T415. | Pergi ke bank menarik uang untuk membayar karyawannya, tapi dituduh hendak memberi uang untuk Falintil. | Ditahan sehari di kantor polisi Hatolia. | Dicekik, digantung, dan diinjak-injak oleh T415 dan ditendang oleh T416. Di pos polisi, diborgol dan direndam dalam air selama tiga jam. |
| Eugenio de Jesus ⁶⁵⁵ | Hera-Lebos, Dili | Oleh tentara dari Batalion Infanteri [Yonif] 723 | KTP ditemukan sobek pada pemeriksaan. | Ditahan seminggu di Kodim Dili. | Tidak ada laporan tentang penyiksaan |

530. Pada periode ini juga, tahanan politik yang dikirim ke Pulau Ataúro pada awal 1980-an mulai kembali.⁶⁵⁶ Sementara sebagian dari mereka bebas sepenuhnya, yang lain terus dipantau di desa-desa mereka atau ditempatkan di penahanan sementara atau kamp penampungan sementara seperti di Cailaco atau Bonuk (Hatu Udo, Ainaro) (lihat Bab 7.3: Pemandahan paksa dan kelaparan).

Penjara-penjara di Timor-Leste

Pada awal 1980-an, Comarca di Dili, satu-satunya penjara resmi di Timor-Leste, sudah sangat penuh. Operasi-operasi militer mengakibatkan banyak orang ditahan. Mulai 1983, semakin banyak tahanan diadili dan dihukum penjara yang panjang sehingga mereka membutuhkan adanya akomodasi untuk itu.⁶⁵⁷ Beberapa tahanan politik dikirim ke penjara-penjara di Indonesia, tapi masih ada kebutuhan untuk lebih banyak ruang penjara di Timor-Leste. Karena itu, pada 1985 penjara Becora di Dili bagian timur dibuka. Ini diikuti oleh penjara Buruma di Distrik Baucau pada 1986 - 1987 dan kemudian penjara-penjara di Maliana (Bobonaro) dan Gleno (Ermera).^{*}

Penjara-penjara ini dijalankan oleh pejabat sipil di bawah Departemen Kehakiman. Mereka menampung para tahanan yang menunggu diadili dan mereka yang sudah diputuskan bersalah dan divonis. Pada umumnya, kondisi dalam penjara yang dijalankan negara lebih baik daripada banyak pusat-pusat penahanan informal, komando-komando militer, dan institusi polisi dan militer lainnya tempat para tahanan politik ditawan.

Penyiksaan dan penganiayaan

Penyiksaan dan penganiayaan di lembaga-lembaga ini lebih jarang terjadi daripada di pusat-pusat penahanan lainnya. Tidak ada laporan mengenai penyiksaan yang diterima dari para tahanan di penjara Maliana dan Gleno, walaupun beberapa mantan tahanan di Penjara Becora melaporkan penganiayaan berat oleh sipir penjara.[†] Penyiksaan dilaporkan terjadi di Buruma. Januari Freitas Ximenes yang bekerja sebagai sipir di Penjara Buruma antara 1990-1999 mengatakan kepada Komisi bahwa ia melihat orang-orang

^{*} Karena hancurnya berkas-berkas dan catatan pemerintah Indonesia di Timor-Leste, Komisi tidak dapat menentukan kapan penjara Maliana dan Gleno pertama kali dibuka. Namun, pernyataan-pernyataan yang diterima Komisi menggambarkan penahanan di lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa tempat-tempat ini pertama kali dibuka sekitar 1990.

[†] Sebagai contoh, Manuel Pereira mengatakan kepada Komisi bahwa ia ditahan di Penjara Becora selama enam bulan pada 1987, di mana ia sering dibiarkan di bawah terik matahari untuk waktu yang lama dan pernah sekali disuruh menarik ban mobil yang dikaitkan pada lehernya, bersama tahanan-tahanan lainnya. [Pernyataan HRVD 0928. Lihat juga Pernyataan HRVD 0185; 3729; dan 5079]. Kasus penyiksaan dan penganiayaan di LP Baucau tercakup dalam Pernyataan HRVD 7817.

disiksa selama interogasi polisi. Seorang laki-laki disiksa “selama 40 hari di sebuah sel sampai ia babak-belur dan tidak berdaya.” Polisi kemudian memaksa petugas penjara ikut dalam pemukulan tahanan. Ia mengatakan bahwa: “Saya dipaksa dan diancam dengan senjata [untuk menampar seorang tahanan] dan kalau saya tidak melakukannya mereka akan membunuh saya.”⁶⁵⁸ Mário Filipe melaporkan bahwa ia selalu disiksa di Buruma oleh Brimob.⁶⁵⁹

Sel gelap

Semua penjara memiliki ‘sel gelap’ (terkadang disebut sebagai ‘sel khusus’) di mana para tahanan tidak diberi cahaya dan udara segar. Sel-sel digunakan untuk tahanan-tahanan baru, untuk penghukuman, atau penyekapan terisolasi.⁶⁶⁰ Beberapa sel gelap di Penjara Buruma memiliki jamban dan fasilitas mandi dan alas untuk tidur. Sel-sel gelap di Penjara Gleno memiliki wadah cuci dan jamban. Komisi mendengar bahwa beberapa tahanan disekap di sel-sel gelap untuk jangka waktu panjang, dan ini merupakan perlakuan kejam dan merendahkan martabat. Octavio da Conceição menceritakan mengenai penderitaan psikologis setelah ditahan selama tiga bulan di sel gelap di Penjara Becora.⁶⁶¹ Eduardo Lopes (Lorico Lopes) yang ditangkap pada 1995 menghabiskan empat tahun di Penjara Maliana tanpa pernah melihat cahaya matahari.⁶⁶²

Sanitasi dan kebersihan di penjara-penjara negara berada di bawah standar yang disyaratkan untuk perlakuan yang manusiawi terhadap para tahanan sesuai dengan Konvensi Jenewa, dan kondisinya tampak tidak semakin baik dari waktu ke waktu. Mario Felipe menceritakan mengenai kondisi di Buruma pada 1997: “Ada sebuah jamban dalam sel tapi tidak ada air, jadi selalu ada bau kotoran dan air kencing yang menyengat.” Kondisi di Penjara Maliana tidak lebih baik. Di pengujung 1990-an, kebersihan di dalam sel yang bau dan kotor itu sungguh buruk, khususnya mengingat para tahanan harus makan, mandi, menggunakan jamban, dan tidur tanpa alas di ruangan yang sama.⁶⁶³ Para mantan tahanan yang ditahan di Timor-Leste selalu melaporkan bahwa mereka harus tidur di lantai semen, sering tanpa alas dan terkadang lantainya lembap.

Kondisi sanitasi juga sering disebutkan kepada Komisi sehubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang lain. José da Costa Ximenes yang ditahan pada 1994 di Penjara Buruma di Baucau dipisahkan dari yang ditangkap bersama-sama dengannya. Ketika ia memprotes, kepala penjara T419 menghardiknya sebagai bangsat dan memerintahkan untuk memasukkannya ke sel gelap selama sepuluh hari.

* Mário Filipe ditahan selama dua bulan di Buruma, Baucau, pada 1997, kemudian dipindahkan ke Penjara Kalisosok, Surabaya, Jawa Timur. Selama tiga bulan sebelum Jajak Pendapat di Timor-Leste ia ditahan di penjara Semarang, Jawa Tengah. [CAVR, Wawancara dengan Mário Filipe, Baucau, 3 September 2004.]

*Saya hanya diberi makan bubur dan nasi kering. Sel gelap itu disediakan kamar mandi yang tidak jauh dari lantai di mana saya tidur. Jadi pada saat mandi saya harus hati-hati menumpahkan air, jika tidak maka lantai akan basah. Ukuran sel kecil sekali dan saya tidak bisa bergerak.*⁶⁶⁴

Setelah para tahanan dihukum dan dipidana mereka pada umumnya diperlakukan lebih baik daripada mereka yang masih menunggu persidangan. Mereka biasanya dipindahkan dari sel-sel gelap ke ruangan biasa. Mereka tidak lagi diinterogasi dan dapat lebih bebas bergerak di dalam penjara. Akan tetapi para sipir sering memperlakukan tahanan politik dan narapidana biasa secara berbeda. Felismina da Conceição menceritakan mengenai Penjara Becora pada 1992:

*Mereka lebih memperhatikan tahanan kriminal daripada kami [tahanan politik]. Kalau dari tahanan biasa ada yang sakit mereka bisa mendapat pengobatan dari luar [dibawa ke rumah sakit], sedangkan kami yang sakit harus menjalani pengobatan di dalam sel.*⁶⁶⁵

Julio Araújo Martins, yang ditahan di Penjara Gleno, mengatakan bahwa gerakan para tahanan politik di dalam penjara dibatasi.

*Saya tidak bebas untuk berbicara dengan tahanan lain. Karena saya adalah tahanan politik, mereka mencurigai kalau saya memberi pengaruh kepada tahanan lain. Jadi, saya sendiri dalam satu sel.*⁶⁶⁶

Periode isolasi singkat ini juga dialami oleh enam orang yang dipenjara di Becora setelah dibuktikan keterlibatan mereka dalam demonstrasi Santa Cruz 1991:

*Kami yang [katanya] kepala keras itu disisihkan untuk dibuang ke tempat lain. Jadi kita yang enam orang itu tinggal di sana sendiri satu blok. Pintunya dikunci tidak boleh kontak dengan yang lain selama satu tahun lebih. Jadi kita berkebun di sana, kita main pingpong di sana.*⁶⁶⁷

Kadang-kadang para tahanan dapat meninggalkan lokasi penjara namun tampaknya hal ini tidak berlaku bagi tahanan politik. Felismina da Conceição mengatakan bahwa para sipir di Penjara Becora akan mendampingi narapidana biasa (kriminal) ke acara keluarga seperti pemakaman atau pesta, akan tetapi tahanan politik tidak diperlakukan seperti ini.⁶⁶⁸ David da Conceição Thon, salah satu yang ditahan di Penjara Becora setelah Pembantaian Santa Cruz, menjelaskan bahwa setelah dua sampai tiga bulan penahanan ia diperkenankan keluar gedung untuk mengambil air bersih dan pergi ke gereja. Pada akhirnya ia dapat membayar beberapa penjaga untuk membiarkannya pulang pada malam hari dan kembali keesokan paginya.⁶⁶⁹

1989 – 1998

531. Bahkan setelah Timor-Leste “dinormalisasi” dan dibuka untuk dunia luar pada 1989, penahanan anggota klandestin terus berlanjut.

532. Terkadang anggota klandestin yang tertangkap memberikan informasi kepada militer atau polisi, dan mengakibatkan penangkapan lebih banyak. Sebagai contoh di Liquiçá pada November 1990, setelah tertangkapnya para pemimpin CNRM termasuk Amadeo Dias dos Santos dan Agustinho dos Santos,⁶⁷⁰ bagian yang cukup besar dari jaringan klandestin terungkap.⁶⁷⁰ Penangkapan-penangkapan terjadi di desa-desa seperti Loidahar, Luculai, dan Darulete (semua Liquiçá, Liquiçá).⁶⁷¹ Di Loidahar, Kepala Desa T420 menangkap beberapa orang, terkadang disertai oleh Babinsa T421.[†] Ia kemudian menyerahkan tahanan kepada SGI atau Koramil Liquiçá, tempat mereka diinterogasi dan disiksa.⁶⁷² Sebagian besar dari mereka ditahan selama sepuluh hari sampai dua minggu. Satu orang di antaranya, António Hatuli, telah membagi-bagikan bendera Fretilin, sementara António Alves diketahui memiliki bendera Fretilin.⁶⁷³

533. Pernyataan berikut, mengenai sebuah penangkapan pada November 1990 di Liquiçá, menggambarkan praktik mengalihkan tahanan dari tangan satu aparat keamanan ke aparat lainnya untuk interogasi berkelanjutan:

Pada tanggal 10 November 1990 [seorang TNI anggota Kodim Liquiçá, T422 bersama [anggota] SGI menangkap saya di kediaman Pastor Paroki Liquiçá. Mereka membawa saya ke Kodim Liquiçá untuk diinterogasi. Selama interogasi berlangsung saya ditendang sampai jatuh ke lantai. Kemudian mereka menginjak dan memukul punggung saya dengan batu sampai saya pingsan dan jatuh tersungkur ke lantai. Kemudian diinterogasi oleh Kepala Seksi Intelijen Kodim Liquiçá, bernama T423, saya ditindih dengan meja pada kaki lalu diduduki oleh salah seorang anggota TNI dan saya juga dipukul dengan batu saat interogasi berlangsung dan saya pun pingsan lagi kedua kalinya.

Setelah sadar, saya diborgol oleh seorang polisi dan dibawa ke Polres Liquiçá. Di sana saya dirawat oleh polisi, luka memar saya dikompres dengan betadin dan diperban. Kemudian saya ditelanjangi dan dimasukkan dalam sel. Pada pukul 17.00 juga pada waktu itu ada jemputan dari Gardapaksi⁶⁷⁴ dan SGI dari Dili dan membawa saya ke Markas SGI di Kolmera, Dili. Sesampainya di Colmera anggota SGI bernama T424 langsung meninju saya pada pipi kiri dan kanan sampai saya jatuh ke lantai.

* Kepala Desa Darulete yang kemudian dipecat.

† Lihat Pernyataan HRVD 2989. Kepala-kepala desa lain di Distrik Liquiçá yang terlibat penangkapan orang atau mengancam mereka di akhir 1990 adalah T426 (Desa Leorem) [Pernyataan HRVD 2177] dan T427 (Bazartete) [Pernyataan HRVD 0956].

Secara perlahan-lahan saya bangun dan diinterogasi oleh anggota SGI. Dalam interogasi itu anggota SGI itu memukul saya, menendang, dan juga menampar hingga benar-benar saya babak belur. Setelah itu saya dipindahkan ke Kolakops Farol [kantor Investigasi SGI], di sana pakaian saya dibuka satu per satu oleh seorang anggota SGI bernama T425 dan setelah itu dia mengikat saya dengan kabel pada kursi lalu menyetrum saya dengan listrik pada kedua ujung kaki dan kedua telinga saya.⁶⁷⁵

Penahanan seorang pemimpin klandestin

Jaringan klandestin di Ossu (Ossu, Viqueque) sangat kuat pada akhir 1980-an dan 1990-an. Jaringan ini dipimpin oleh José da Silva Amaral (Asuloko). Ia dan rekan-rekannya memberi makanan, pakaian, obat-obatan, dan informasi intelijen mengenai kegiatan-kegiatan militer kepada pihak Resistansi. José menceritakan bagaimana jaringan ini perlahan memperluas jangkauan operasinya dari Kota Ossu ke seluruh kecamatan sehingga pada akhirnya seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak terlibat dalam kegiatan klandestin.

José da Silva Amaral menuturkan kepada Komisi bahwa pada 17 Juli 1991 ia ditangkap oleh seorang anggota Kopassus T428. T428 membawa José Amaral ke rumah milik anggota DPRD, T429, yang ketika itu digunakan untuk menahan dan menyiksa orang dan menginterogasi dia.

Ketika José Amaral menolak menjawab pertanyaan, ia disuruh melucuti pakaiannya dan T28 dengan seorang rekan Timornya, T430, memasukkannya ke dalam tangki yang berisi air dan es batu dan membiarkannya di sana selama tiga jam. Kemudian T430 mengambil setimba air es dan menuangkannya di atas kepala José Amaral. José Amaral tidak lagi kuat menahan dingin. Ia berteriak bahwa mereka sebaiknya membunuh saja dia dan mengatakan pada T428 bahwa kalau ia dikeluarkan ia akan menceritakan yang sebenarnya. T428 kemudian meneruskan interogasi dan José Amaral memberikan nama rekan-rekannya yang ia tahu sudah ditangkap seperti Mário Miranda dan Fernando Nahabia. T428 tidak puas atas informasi ini kemudian mengeluarkan pistol dan mulai menghajar tangan José Amaral sampai berdarah. José Amaral mengeringkan darahnya di celananya, dengan maksud untuk menunjukkannya kepada ICRC kelak, tapi T428 melihat darah itu dan memerintahkan seseorang untuk membersihkan dan mencuci celananya. Setelah itu, kumis Amaral dicabut satu per satu dan ia mulai dipukuli dan ditendang sampai pingsan. Ia ditahan di rumah T429 selama sebulan dan kemudian di Kotis selama dua bulan.

Setelah José Amaral dibebaskan, anggota Koramil Viqueque datang dan menangkapnya di rumahnya. T428 muncul kembali dan membawa José Amaral ke *base camp* di Manatuto. Dalam kondisi diikat, ia dimasukkan dalam kotak yang kemudian diangkut ke sebuah helikopter menuju Manehat, Barique, Natarbora. Setelah dua bulan, Amaral kemudian dipindahkan kembali ke Rumah Merah di Baucau, di mana ia ditahan bersama Alberto Espirito Santo, José Manuel, Filomeno, dan perawat Victor Viegas. Di sini, T431 menginterogasi dan menelanjinginya, sementara Mudakir memukulinya dengan batangan besi. Interogasi dimulai pukul 09.00 sampai pukul 15.00, sampai mematahkan tangan Amaral. Ia ditahan di Rumah Merah selama setahun dan kemudian dibebaskan tanpa diadili.⁶⁷⁶

534. Kadang-kadang seluruh desa dicurigai sebagai klandestin dan ditangkap oleh militer:

- Di Desa Moro dan Suro-Kraic (Ainaro, Ainaro), 40 orang dilaporkan ditangkap pada Oktober 1990 setelah ditemukan dokumen klandestin yang mengimplikasikan keterlibatan desa-desa dalam aktivitas klandestin. Sebagian besar tahanan dibebaskan setelah diinterogasi, tapi sebagian ditahan selama beberapa minggu.⁶⁷⁷
- Di Desa Tutuluro dan Babulu (Same, Manufahi) pada November 1992, setidaknya 40 anggota klandestin ditangkap oleh polisi.⁶⁷⁸ T432, di bawah perintah polisi Binpolda T433, memanggil mereka ke balai desa. Mereka diperiksa tentang pengiriman barang ke hutan. Polisi kemudian menyerahkan kelompok ini ke kepala seksi intelijen T434 di Kodim Manufahi. Ia kemudian membawa kelompok ini ke *base camp* di Same. Di sini para tahanan disuruh duduk bersandar ke tembok dan kemudian dipukuli dan ditendang. Setelah pemukulan, mereka disuruh memotong rumput sampai petang. Semuanya, kecuali enam orang di antara mereka, kemudian dibebaskan. Keenam orang ini adalah Raul da Costa, Anteiro, Paulo da Costa, Marito da Costa, Benigno, dan Hilario, yang menjadi 'tahanan luar' selama 18 bulan.⁶⁷⁹
- Pada 15 Januari 1995, Kodim Liquiçá 1638 melancarkan operasi di Desa Gariana (Vatuvou, Maubara, Liquiçá) karena para penduduk desa dicurigai menyembunyikan anggota Falintil.⁶⁸⁰ Mereka menangkap penduduk Gariana, termasuk kepala desa, José Nunes, Abel Nunes, Victor, Augusto Pinto, Joanico Sampanho, Fernando Pinto Nunes, dan Filomeno.⁶⁸¹ Keenam pria ini kemudian ditembak mati (lihat Bab 7.2. Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Sebelum kematian mereka, mereka dibawa ke pos Karbaudabas dan diinterogasi semalaman. Empat dari laki-laki ini disiksa dengan digantung di leher sampai mereka tak sadarkan diri oleh seorang tentara Timor, T435, dan prajurit T436.* Korban lain, Mário da Silva, tidak

* Mereka akhirnya ditembak oleh pelaku yang sama. Pernyataan HRVD 3004.

dibunuh tapi diinterogasi oleh Letnan Satu T437.^{*} Selama interogasi, prajurit lain, T438, memotong jari kakinya dengan kaki meja, menginjak-injaknya dengan bot tentara, dan menghajarnya dengan senapan.⁶⁸² Menurut masyarakat Vatuboro (Maubara, Liquiçá), setelah insiden di Gariana, ABRI dan kakitangannya mulai mencurigai pemuda di seluruh Distrik Liquiçá bekerjasama dengan Falintil.⁶⁸³

- Di Uatolari (Viqueque) pada 1998, komandan Koramil Uatolari, T439, dan anakbuahnya menangkap 100 penduduk karena menjadi anggota kelompok prokemerdekaan 55 (baca “Cinco-Cinco”). Setelah ditangkap mereka diikat, ditendang, ditusuk dengan senapan, dan dibawa ke Koramil Uatolari. Mereka kemudian dibawa ke Kodim Viqueque, tempat mereka ditahan selama tiga bulan. Ketika dalam tahanan, mereka diinterogasi dalam keadaan diikat dengan kabel. Mereka juga dipaksa berdiri menghormat bendera Indonesia setiap hari. Setelah dibebaskan, mereka harus melapor dua kali seminggu.⁶⁸⁴ Selain penangkapan di daerah perdesaan, anggota gerakan klandestin di Dili juga ditangkap. Pada sebuah kasus, Komisi mendengar tiga pemuda, Alexandre dos Santos, saudaranya João Xavier,[†] dan Mariano da Costa yang ditangkap bulan Oktober 1990 karena pihak penguasa percaya mereka merencanakan hendak membakar rumah Camat Jaime Oliveira. Anggota polisi, militer, dan intelijen mengejar para pemuda ini dari pinggiran Dili di Fatuhada ke Hudi Laran, sambil menembaki mereka. Ketika tertangkap, mereka dihajar dengan rantai motor dan pipa besi. Mereka kemudian dibawa ke pos polisi setempat dan diinterogasi. Setelah itu mereka dibawa ke sebuah klinik untuk dirawat luka-lukanya. Setelah tiga hari di Polres, mereka dibawa dan ditahan ke penjara Becora selama 17 hari.⁶⁸⁵

Penangkapan klandestin di Dili

Chiquito da Costa Guterres mulai bekerja sebagai *estafeta* dari 1994 membawa dokumen-dokumen penting untuk Resistansi dari Dili ke Manatuto. Ia ditangkap pada 21 Februari 1996 oleh agen intelijen polisi di Toko Foto Juwita di Colmera ketika ia hendak mencuci-cetak foto untuk Falintil. Ia dimasukkan ke dalam taksi dan dibawa ke pos polisi lalulintas, tempat ia diperiksa selama

^{*} T436 dan T437 terbukti bersalah oleh pengadilan militer tidak mematuhi perintah atasan, menyuruh orang lain melakukan pembunuhan, dan membuat laporan palsu kepada atasannya. (Amnesty International, *Indonesia dan East Timor: Twenty years of violations: statement before the United Nations Special Committee on Decolonization*, July 1995, AI Index: ASA 21/33/95 (Amnesty International, *Indonesia dan Timor Timur: 20 Tahun Kekerasan*; pernyataan di hadapan Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi, 11 Juli 1995 AI Index: ASA 21/33/95).

[†] Dalam masyarakat Timor-Leste, seorang yang dipanggil sebagai ‘saudara’ atau ‘saudari’ dapat berarti keponakan, sepupu laki-laki, atau sepupu perempuan atau bahkan anggota keluarga luas (*extended family*), teman baik, atau kenalan.

beberapa jam mengenai siapa-siapa saja pemimpinnya dan siapa yang menyuruhnya mencuci-cetak foto. Ia dipukuli dan diberi kejut listrik oleh polisi. Polisi kemudian memindahkannya ke Polres Mercado Lama, di mana ia terus diinterogasi. Kali ini matanya ditutupi dengan kain dan ia ditelanjangi dan dipukuli oleh agen intelijen polisi. Ia dipaksa menandatangani surat yang isinya tidak sesuai dengan apa yang ia ungkapkan dalam interogasi. Setelah dua hari, ia dipindahkan ke Polda di mana para anggota SGI dan polisi intelijen menginterogasinya sembari meremukkan jemari kakinya di bawah kaki kursi yang diduduki orang dan dihantam dengan kursi sampai ia tak sadarkan diri. Setelah itu ia ditempatkan di 'sel gelap'.

Pada malam hari polisi intelijen mengeluarkannya dari sel dan membawanya ke Tacitolu, di pinggiran kota Dili:

Mereka [Intel polisi] membiarkan saya berdiri di pantai, air laut naik turun membasahi kaki saya, dan mereka juga melepaskan tembakan pistol. Arah pistol diarahkan ke mana saya tidak tahu. Setelah beberapa saat mereka membawa lagi saya ke sebuah pohon dan pohon itu penuh dengan duri-duri sehingga menusuk kaki saya. Kemudian mereka mengikat saya di situ lalu melepaskan lagi tembakan, ini merupakan satu teror mental agar saya mengatakan yang sebenarnya.

Setelah sebulan di Polda, Chiquito dipindahkan lagi ke SGI Colmera, tempat ia ditahan selama seminggu. Di situ ia tidak dilukai secara fisik, namun tetap diancam akan disiksa. Ketika ditanya mengapa ia selalu dipindah-pindahkan antara berbagai tempat penahanan, Chiquito menjelaskan:

Alasan saya dipindahkan dari polisi lalulintas ke Polres karena kantor lalulintas itu bukan tempat tahanan dan tidak ada jaminan bahwa tahanan tidak akan melarikan diri. Kemudian saya dipindah dari Polres ke Polda karena Polres bukan untuk tahanan definitif [tetap] dan tidak ada jaminan kalau tahanan tidak melarikan diri. Alasan dipindahkan dari Polres ke SGI Colmera yang pertama karena mereka tidak mendapatkan bukti-bukti yang konkret untuk membawa saya ke pengadilan untuk disidang; yang kedua mereka pikir bahwa di SGI Colmera lebih keras, mereka bisa menyiksa saya untuk mendapatkan bukti yang lebih konkret; yang ketiga agar mereka menyiksa saya lebih berat agar saya menyebut teman-teman Klandestin lain dan teman-teman yang berjuang di hutan, tapi sebetulnya di sana para SGI tidak melakukan penyiksaan fisik, tapi hanya melakukan penyiksaan secara mental.⁶⁸⁶

Penangkapan anggota klandestin di Indonesia

535. Pada 1980-an, banyak warga Timor-Leste mulai tinggal, bekerja, dan belajar di Indonesia, dan pada akhir 1980-an kelompok-kelompok klandestin aktif mulai dibentuk di kota-kota di Indonesia. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan klandestin di Indonesia berisiko ditangkap dan ditahan oleh pihak penguasa Indonesia. Komisi telah menerima laporan-laporan tentang penangkapan dan penganiayaan terhadap warga Timor-Leste yang dicurigai terlibat kegiatan klandestin di Bandung,⁶⁸⁷ Semarang, Solo, dan Surabaya, Jakarta,⁶⁸⁸ Malang, Yogyakarta,⁶⁸⁹ dan Denpasar, Bali.⁶⁹⁰

536. Dalam satu kasus, José Neves tertangkap di Kantor Pos Pusat Malang pada 18 Mei 1994 ketika akan mengirim dokumen yang memerinci pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste untuk sebuah kelompok solidaritas di Jerman. Petugas pos membuka dokumennya dan setelah melihat nama-nama Xanana Gusmão sadar bahwa mereka terlibat dalam gerakan Resistansi di Timor-Leste. Dalam waktu 30 menit dua orang dari Kejaksaan dan petugas intelijen berpakaian sipil datang dan menangkap José Neves. Ia kemudian dibawa ke Polwil Malang dan diinterogasi:

Selama ditahan, interogasi dilakukan terus pada sore dan malam hari oleh bagian intel dan bagian reserse. Interogasi dari bagian intel lebih terarah pada usaha-usaha mencari jaringan klandestin dan kegiatan organisasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sedangkan bagian reserse melakukan penyidikan untuk proses pengadilan. Selama interogasi ada perlakuan kasar seperti dicaci maki, diancam mau dipukul atau ditembak, tetapi tidak sampai memukul. Ada kata-kata seperti “mahasiswa bodoh”, “suka membuat kekacauan” dan “mengganggu ketenteraman masyarakat”. Selain itu mereka menjelekkkan orang Timor-Timur itu bodoh, orang Timor-Timur tidak tahu berterima kasih, orang Timor-Timur terbelakang.⁶⁹¹

537. Setelah lima bulan dalam penahanan José Neves diadili dan dihukum empat tahun penjara. Ia menjalani hukuman di Penjara Lowokwaru Malang selama dua setengah tahun mulai Februari 1995 sampai September 1997.

Demonstrasi

538. Demonstrasi merupakan konteks yang melatari penahanan, penganiayaan, dan penyiksaan, yang khas pada periode ‘normalisasi’. Kegiatan perlawanan publik ini dipimpin oleh jaringan klandestin kota yang muncul pada akhir 1980-an. Kegiatan ini menjadi strategi ampuh bagi Resistansi. Akan tetapi strategi ini membuat para anggota Resistansi mudah terlihat oleh penguasa dan ratusan dari mereka kemudian ditangkap pada tahun-tahun itu dan setelahnya (lihat Bagian 3: Sejarah konflik; dan Bagian 5: Resistansi: Struktur dan strategi).

539. Demonstrasi-demonstrasi publik ini dimulai setelah pada 1989 Presiden Soeharto membuka delapan dari 13 kabupaten di Timor-Leste kepada masyarakat Indonesia dan pengunjung serta delegasi asing. Demonstrasi-demonstrasi ini merupakan cara untuk menyampaikan pesan Resistansi kepada dunia luar. Demonstrasi besar pertama dilaksanakan pada Misa di Tacitolu selama kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada Oktober 1989. Selama dua tahun berikutnya, demonstrasi yang terorganisasi menjadi hal yang biasa terjadi sampai terjadi penumpasan militer di perkuburan Santa Cruz pada 1991, yang kemudian diikuti dengan penangkapan dan penahanan banyak tokoh Resistansi. Dengan demikian laporan tentang penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terkait demonstrasi kemudian menurun jumlahnya pada 1993, tapi terus terjadi dengan munculnya generasi baru aktivis mahasiswa, khususnya dari Universitas Timor Timur (Untim). Jumlah penangkapan dan penyiksaan yang terkait demonstrasi-demonstrasi besar pada saat jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998 cukup rendah (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

540. Korban penangkapan dan penyiksaan terkait demonstrasi umumnya adalah pemuda-pemuda kota dari Dili dan Baucau. Banyak di antaranya adalah siswa SLTA dan para mahasiswa universitas.

541. Pembahasan berikut ini adalah mengenai sifat dan cakupan penangkapan sewenang-wenang terhadap para demonstran sebagai antisipasi dari sebuah demonstrasi, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan pada atau setelah sebuah demonstrasi, serta pola interogasi dan penyiksaan.

Penangkapan mengantisipasi sebuah demonstrasi

542. Penguasa Indonesia cukup banyak menyisihkan waktu, usaha, dan biaya untuk menekan demonstrasi dan bentuk pengungkapan pendapat politik publik lainnya. Banyak kasus penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terkait demonstrasi yang terorganisasi terjadi bahkan sebelum demonstrasi terjadi. Karena biasanya demonstrasi diadakan dalam rangka kunjungan-kunjungan internasional atau untuk memperingati hari tertentu, demonstrasi-demonstrasi ini bisa diantisipasi. Orang ditangkap atas dasar informasi intelijen spesifik atau pengetahuan umum tentang jaringan klandestin. Sekolah-sekolah tertentu yang dikenal karena aktivitas perlawanannya secara rutin dirazia oleh polisi dan militer untuk mencari bacaan prokemerdekaan atau untuk menangkap anggota klandestin.*

Kunjungan Sri Paus Yohanes Paulus II

543. Setidaknya tiga bulan sebelum kunjungan Sri Paus Yohanes Paulus II pada 12 Oktober 1989, sebuah operasi militer yang intens dimulai di seluruh wilayah untuk menangkap orang-orang yang berpotensi membuat kekacauan dan untuk

.....
* Sekolah-sekolah yang dijadikan sasaran antara lain SMP Katolik Santo Paulus VI dan sekolah Externato, keduanya di Dili; SMP São José di Balide, Dili; dan SMP IV Fatumeta serta STM Fatumaca (juga dikenal sebagai sekolah João Bosco) di Baucau, keduanya di Baucau. CAVR, Wawancara dengan José Manuel da Silva Fernandes, Dili, 31 Oktober 2002

mencegah pejuang gerilya memasuki desa dan kota.^{*} Ribuan tentara menjaga Dili, juga Kota Aileu dan Ermera.⁶⁹² Gregório Saldanha, seorang anggota klandestin, termasuk salah satu yang ditangkap selama operasi ini.[†] Ia menjelaskan:

Pada saat itu militer Indonesia berpikir bahwa dengan menangkap kami demonstrasi menyambut kedatangan Paus tidak akan terlaksana. Mereka menangkap kami untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Penyebab lain kami ditangkap adalah [agar] terbongkarnya jaringan yang kami bentuk. Tetapi perkiraan militer Indonesia ternyata keliru, teman-teman lain tetap melakukan aksi saat kedatangan Paus pada tanggal 12 Oktober 1989, karena mereka telah terorganisir dengan rapi.⁶⁹³

544. Secara keseluruhan ada 34 orang yang ditahan, awalnya di markas Batalion 744 kemudian di markas SGI Colmera. Semuanya menjalani lima sampai enam bulan penahanan tanpa mendapat kunjungan dari anggota keluarga atau lembaga-lembaga pemantau internasional (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

Delegasi Parlemen Portugal

545. Pada 1991 terjadi peningkatan aktivitas politik dalam mengantisipasi rencana kunjungan delegasi parlemen Portugal pada 4 November 1991.^{*} Pihak Resistansi melihat kunjungan ini sebagai kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada dunia luar, dan pada April 1991 mereka menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh kelompok pemuda untuk membuat rencana untuk kunjungan tersebut. Di akhir pertemuan CRNJT (*Conselho Resistência Nacional Juventude Timor*, Dewan Resistansi Pemuda Nasional Timor-Leste) dideklarasikan dan José Manuel da Silva Fernandes terpilih sebagai presiden. Tujuan utama CRNJT adalah untuk merencanakan penyambutan delegasi parlemen Portugal.⁶⁹⁴ Spanduk-spanduk dibuat dan demonstrasi damai telah direncanakan untuk diadakan di seluruh wilayah Timor-Leste oleh berbagai kelompok pemuda, dari Dili sampai Baucau dan Oecussi.⁶⁹⁵

546. Militer Indonesia telah bertekad mencegah aksi Resistansi dan demonstrasi lebih lanjut setelah dipermalukan pada misa Sri Paus di Tacitolu. Komando Daerah Militer (Kodam) di Bali, Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) menyusun dokumen setebal 150 halaman yang memerinci rencana operasi yang dimulai tiga bulan sebelum rencana kunjungan.⁶⁹⁶ Sebagai bagian dari rencana ini jumlah pasukan ditingkatkan

* Dokumen "35 Tahun Darma Bakti Kostrad", Perpus Lemhanas [tanpa tanggal], mengatakan: "...seluruh sektor, khususnya Kodim 1627/Dili, mengadakan Pam dalam rangka kunjungan Paus Johannes Paulus II ke Dili." hal 97.

† Amnesty Internasional melaporkan bahwa Filomeno Paixão de Jesus dan Hermegildo da Conceição ditahan pada Juni 1990 dan dibawa ke gudang militer di Dili, yakni Gudang Municipal (Amnesty International, Amnesty International Statement to the United Nations Special Committee on Decolonization, AI Index: ASA 29/09/90, Agustus 1990. hal. 2)

‡ Pada awalnya dijadwalkan untuk tanggal lebih awal, tapi diubah jadwalnya beberapa kali.

secara signifikan* dan kelompok-kelompok paramiliter diperintahkan mengorganisasi demonstrasi prointegrasi.† Militer berkunjung ke desa-desa di seluruh Timor-Leste untuk memperingatkan masyarakat bahwa mereka yang dicurigai terlibat dalam kegiatan klandestin seputar kunjungan delegasi parlemen akan dibunuh.‡ Selain itu militer menangkap semua orang yang dicurigai akan ikut dalam aksi atau demonstrasi.

547. Di Dili, banyak dari orang-orang yang ‘biasa dicurigai’ dijadikan sasaran penangkapan. Afonso Maria, yang sebelumnya pernah ditangkap pada 1987, 1988, 1989, dan 1990, melaporkan bahwa ia ditangkap lagi pada 1991 karena militer di Jakarta menerima informasi bahwa ia telah membuat rencana untuk kunjungan parlemen. Afonso dibawa ke Nusra Bhakti di Dili tapi menurutnya banyak orang lain yang ditangkap pada saat yang sama dibawa keluar Dili dan ditahan di Baucau dan Viqueque, dalam upaya memisahkan mereka dari jaringan klandestin.⁶⁹⁷

548. Penangkapan juga dilakukan di luar Dili. Jorgé Flores dos Santos mengatakan kepada Komisi bahwa pada 14 November 1990 ia dan dua temannya, Calistro dan Amadeo, dipanggil ke Kodim Liquiçá oleh T423, kepala seksi intelijen (Kasi Satu) dan anggota Kodim, T422, karena mereka menerima informasi bahwa ketiga pemuda ini tengah merencanakan sesuatu untuk delegasi Portugal. Mereka langsung dibawa ke Koramil Liquiçá, tempat Sersan Kolakops T442, dua anggota ABRI, dan seorang polisi bergantian menendang, meninju, dan memukuli mereka sebelum menginterogasi. Pada hari yang sama, ketiganya diserahkan ke Kopassus dan dibawa ke Dili untuk ditahan di Nusra Bhakti. Di sini tidak ada interogasi atau penganiayaan yang dilakukan.⁶⁹⁸ Keesokan harinya 15 November, Jorgé Flores dos Santos dipindahkan ke Penjara Balide di mana ia ditahan selama lima hari tanpa pakaian di dalam sel gelap penuh kotoran manusia dan ia diberi makanan yang “lebih cocok untuk binatang”. Akhirnya, ia dikembalikan ke Nusra Bhakti selama tiga minggu lagi dan diperintahkan menerjemahkan dokumen-dokumen yang telah didapat oleh anggota SGI.⁶⁹⁹

549. Karena semakin banyak aktivis-aktivis yang sudah dikenal menjadi sasaran penahanan, satu kelompok yang terdiri atas lebih daripada 20 aktivis Resistansi bersembunyi di Gereja Motael di Dili. Pada 28 Oktober 1991 pukul 23.00, anggota militer, polisi, dan SGI mengepung gereja itu kemudian menyerbu masuk. Aktivis-aktivis itu kemudian memberikan perlawanan. Seorang anggota Resistansi, Sebastião Gomes Rangel, ditembak mati dan seorang mata-mata intelijen (*mauhu*), Afonso, juga terbunuh. Bobby Xavier Luis Pereira menceritakan kepada Komisi bahwa keesokan harinya dia dan beberapa orang lainnya, termasuk João Domingos Freitas Leite, Aleixo da Silva Gama (Aleixo Cobra), Bonifacio Bareto, dan Jacob ditahan.

.....
* Tiga unit tempur tambahan (1.629 prajurit) diturunkan (Samuel Moore, “The Indonesian Military’s Last Years in East Timor: An Analysis of Its Secret Documents”, *Indonesia* 72, Oktober 2001, hal. 25; Constâncio Pinto dan Matthew Jardine, *East Timor’s Unfinished Struggle, Inside the Timorese Resistance*, 1997, South End Press, Boston, MA., hal. 177.

† Tim Sukarelawan contohnya, dibentuk oleh Kopassus di Ainaro pada 1991 untuk menunjukkan adanya dukungan bagi integrasi.

‡ Pinto juga menyebut bahwa kuburan massal digali di Tacitolu, Gleno, dan Aileu untuk menakut-nakuti orang. Constâncio Pinto dan Matthew Jardine, *East Timor’s Unfinished Struggle, Inside the Timorese Resistance*, 1997, South End Press, Boston, MA., hal. 178.

Mereka dibawa ke Polwil Dili, sembari ditendang, dipukuli, dan ditinju. Bobby Xavier Luis mengatakan kepada Komisi:

Pada waktu kami ditahan di Polwil, setiap hari kami disiksa dengan berbagai cara dan diinterogasi. Siksaan seperti dipukul dengan tangan, dengan pentungan, ditendang hingga babak belur dan jatuh ke lantai, kemudian disiram dengan air kotor. Setiap hari diinterogasi dan siksaan seperti ini terus berlanjut kurang-lebih selama satu minggu. Mereka yang menyiksa kami pada waktu itu dan yang saya kenal adalah seorang polisi T443, sekarang di Indonesia, polisi T444 asal Lospalos, sekarang di Indonesia, dan polisi T445, sekarang polisi di PNTL [Policia Nacional de Timor-Leste].⁷⁰⁰

550. David da Conceição Thon juga ditahan di Motael pada 29 Oktober, tapi langsung dikirim ke Penjara Becora.⁷⁰¹ Menurut Amnesty International, 20 orang ditangkap di Gereja Motael dengan tuduhan membuat keresahan sosial dan terlibat kegiatan prokemerdekaan.⁷⁰² José Manuel da Silva Fernandes mengatakan kepada Komisi bahwa pastor paroki Motael dan Sekretaris Jenderal (Vikaris Jenderal) Keuskupan Dili, Padre Alberto Ricardo, juga dipanggil untuk diinterogasi. Bobby Xavier akhirnya diadili dan dihukum tiga tahun di Penjara Kupang.⁷⁰³ Aleixo Cobra ditahan awalnya untuk memberi pernyataan saksi, tapi tak lama kemudian juga didakwa dan diadili atas partisipasinya. Ia juga dihukum tiga tahun penjara di Kupang.⁷⁰⁴ Kunjungan parlemen Portugal akhirnya dibatalkan dan tidak ada demonstrasi yang terjadi.

551. Memindahkan orang yang dicurigai sebagai anggota klandestin ke luar Dili untuk mencegah mereka bergabung dalam demonstrasi adalah bentuk penahanan pencegahan, seperti yang dialami Anibal Ximenes:

Pada tanggal 27 September 1994, sekitar jam 8 pagi, saya pergi ke Korem 164 Wira Dharma Dili karena dipanggil melalui surat yang diantarkan oleh Babinsa Hary. Dalam isi surat itu agar saya pergi menghadap Korem 164 Dili Wira Dharma. Sampai di sana saya bergabung bersama 50 orang yang sudah lebih dahulu ditahan di sana, lalu kami dibagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok dibawa ke distrik-distrik dengan tujuan agar kami tidak melakukan aksi demonstrasi, saat kunjungan Kongres Amerika ke Timor Lorosae. Saat itu saya dibawa ke Kodim Baucau di sana selama dua hari dan di Quelicai selama dua minggu. Kemudian saya dibawa kembali ke Kodim Dili selama satu hari lalu dibebaskan.⁷⁰⁵

* Amnesty International juga melaporkan bahwa Pastor Ricardo “menjadi sasaran interogasi yang berulang-ulang dan intensif oleh pasukan keamanan sejak insiden 12 November. Interogasi dihentikan selama masa Natal tetapi dilaporkan kini selesai. Pada 2 Januari 1992 Pastor Ricardo disebutkan menjadi objek interogasi terus-menerus sejak pukul 09.00 hingga 15.30, dan selama itu ia diancam dan dipermalukan secara verbal. Akibat interogasi-interogasi ini, rekan-rekan menyatakan, Pastor Ricardo berada dalam bahaya gangguan psikologis.” Amnesty International, Urgent Action 04/92, AI Index: ASA 21/01/92, 3 Januari 1992. (CAVR, Wawancara dengan José Manuel da Silva Fernandes, Dili, 20 Desember 2004).

Penangkapan pada saat atau setelah kejadian

552. Walaupun ada penangkapan preventif yang gencar sebelum kunjungan delegasi dari luar negeri, gerakan klandestin sering berhasil mengadakan demonstrasi. Penguasa Indonesia merespons aksi ini dengan penangkapan massal para demonstrator dan melakukan tindakan brutal yang kelewatan, jauh melampaui ancaman dari para demonstran. Foto-foto dan rekaman video para demonstran yang diambil oleh intelijen berpakaian preman digunakan untuk menangkap para demonstran yang lolos dari penangkapan pada saat demonstrasi.

Misa di Tacitolu oleh Sri Paus Yohanes Paulus II

553. Misa yang dilaksanakan di Tacitolu (Dili) pada 12 Oktober 1989 oleh Sri Paus, dihadiri oleh kurang-lebih 100.000 orang (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Ketika misa berakhir, sekelompok pemuda prokemerdekaan kemudian menggelar spanduk yang mereka sembunyikan di dalam baju mereka dan mulai meneriakkan slogan-slogan. Para demonstran umumnya adalah siswa SLTA dari Sekolah Externato, STM Fatumaca, Baucau, dan (Escuteiro) Kepanduan Katolik dari Gereja Balide. Kekacauan terjadi. Kursi-kursi dilempar oleh agen-agen keamanan Indonesia, Sri Paus dibawa turun dari panggung, dan polisi serta militer Indonesia menangkap dan menahan para demonstran.* Menurut Uskup Belo, sebagaimana dikutip oleh Asia Watch, 40 orang ditangkap di Tacitolu.† Komisi menerima pernyataan mengenai demonstrasi itu dari Celestino Porfiro da Silva yang bersaksi bahwa banyak orang ditangkap, termasuk Donanciano Gomes dan José Manuel da Silva Fernandes. Keduanya dibawa ke markas SGI di Colmera dan ditahan selama beberapa hari.⁷⁰⁶ Militer menyuruh para pelajar STM Fatumaca yang bisa dikenali dari seragam mereka, naik ke truk untuk dipulangkan ke Baucau. Ternyata mereka dibawa ke markas Batalion Infanteri/Yonif 745 di Comoro.

554. Dengan dibantu foto-foto yang diambil pada saat Misa, militer dapat menangkap demonstran lain yang berhasil lolos pada saat demonstrasi. Komisi mendengar bahwa beberapa orang ditangkap di pos pemeriksaan saat mereka akan kembali ke desanya di luar Dili.⁷⁰⁷ Yang lain ditangkap pada hari-hari atau minggu berikutnya. Contohnya Bobby Xavier Luis Pereira dari Sekolah Externato memberi tahu Komisi bahwa ia ditangkap oleh militer dari Komando Operasi Keamanan (Koopskam) Timor Timur dan dibawa ke Penjara Becora. Ia kemudian dibebaskan dalam waktu sebulan setelah diintervensi oleh ICRC.⁷⁰⁸ José Manuel, salah satu penyelenggara demonstrasi, bersembunyi selama tiga hari, kemudian mencari perlindungan di kediaman Uskup bersama 26 orang lainnya, termasuk Donanciano Gomes, Francisco Sousa, António Mesquita (Maukoer), dan Guilherme. Dia juga mengaku kepada Komisi bahwa setelah sepuluh hari, para demonstran dikunjungi oleh sekelompok personel intelijen dan

* Komisi mendapatkan film tentang Misa tersebut, demonstrasi yang terjadi setelahnya, dan kekerasan yang menyusul, yang menunjukkan agen-agen keamanan Indonesia melemparkan kursi-kursi kepada para demonstran (Film dari ABC Television, Australia, Arsip CAVR).

† Menurut Uskup Belo, 40 orang ditangkap (lihat *Asia Watch*, hal. 76)

aparatus militer, antara lain Kepala Intelijen Kolonel Bimo, Komandan Kolakops Brigadir Jenderal Mulyadi, dan anggota Kopassus dari Jakarta Kolonel Nainggolan. Kelompok ini berusaha meyakinkan mereka untuk menyerah dan membawa Gubernur Mario Carrascalão sebagai negosiator, serta dua orang tahanan—Victor da Costa, anggota CCF, dan Baimetak, pejuang gerilya—untuk menunjukkan kepada para demonstran bahwa tahanan tidak diperlakukan dengan buruk dan menyerah merupakan pilihan terbaik bagi mereka.⁷⁰⁹ Para perwakilan militer ini berjanji kepada Uskup Belo bahwa para demonstran tidak akan disiksa tetapi mereka tetap menolak menyerahkan diri. Seminggu kemudian 5 November, anggota militer kembali dan menangkap kelompok ini dan membawa mereka ke Korem.⁷¹⁰

Kunjungan Dutabesar AS, John Monjo

555. Pada 17 Januari 1990, 100 orang demonstran⁷¹¹ berkumpul di depan Hotel Turismo dan meminta kepada Dutabesar AS untuk Indonesia yang tengah berkunjung, John Monjo, untuk keluar dan mendengarkan petisi yang sudah mereka persiapkan. Dutabesar keluar dan berbicara dengan para demonstran melalui sebuah megafon selama kurang-lebih satu jam. Selama pembicaraan, militer Indonesia berpakaian sipil memotret, merekam gambar video, dan mencatat nama demonstran yang hadir.⁷ Tak lama setelah Dutabesar meninggalkan hotel, polisi antihuru-hara mulai memukuli dan menangkap para demonstran dengan sewenang-wenang.⁷¹² Sebagian besar dari mereka dibawa ke Kodim Dili dan diinterogasi.⁷¹³ (lihat Bagian 3: Sejarah konflik.)

SMPN IV, Dili

556. Tidak semua demonstrasi direncanakan; sebagian terjadi secara spontan sebagai reaksi atas provokasi dari negara, dan demonstrasi-demonstrasi ini juga ditindas penguasa. Sebagai contoh, di SMPN IV (Dili) pada 17 Maret 1990, Bambang Udiyono dari kantor kejaksaan, yang berkunjung ke sekolah itu mengatakan dalam pidatonya: “Kalau kalian membuat korek api saja tidak bisa, bagaimana Timor Timur mau merdeka?”[†] Para pelajar bereaksi marah terhadap pidato ini dan mulai berdemonstrasi. Pasukan Brimob tiba dan bentrok dengan para pelajar, serta menangkap beberapa di antara mereka. Salah satu pelajar yang ditangkap, Francisco da Costa, melaporkan bahwa ia ditahan awalnya di Polres Dili di mana ia dipukuli dan di SGI Colmera di mana ia dituduh terlibat gerakan Resistansi, ditelanjangi, dan dipukuli sampai pingsan.⁷¹⁴

.....
* Seorang anggota Kodim dalam seragam militer terlihat merekam gambar video secara terbuka, sementara para petugas intel berpakaian sipil terlihat memotret. (Statutory Declaration of Andrew John MacMillan before the Commissioner of Oaths, Darwin Australia, Januari 23, 1990; lihat juga CAVR, Wawancara dengan Simplicio Celestino de Deus, Dili, 8 Oktober 2004.)

† Frase ini mirip sama dengan frase yang dilaporkan digunakan oleh partai UDT pada tahun 1974-1975 saat mereka mengklaim Timor-Leste tidak layak berkembang jika segera merdeka. Komisi mempunyai sejumlah referensi tentang hal ini dalam sejumlah pernyataan. [Lihat sebagai contoh, kesaksian-kesaksian Manuel Agustinus Freitas, Manuel Duarte dan Francisco Xavier do Amaral kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.]

Demonstrasi Santa Cruz

557. Demonstrasi Santa Cruz merupakan demonstrasi publik yang paling dikenal yang pernah terjadi di Timor-Leste. Video pembantaian di kuburan Santa Cruz pada 12 November 1991 mengubah nasib wilayah ini dengan menarik perhatian dunia internasional kepada situasinya. Selain ada orang-orang yang terbunuh pada demonstrasi ini (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa) banyak juga yang ditangkap dan ditahan. Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi tentang peristiwa ini menggambarkan metode penangkapan sewenang-wenang yang brutal yang melibatkan pemukulan hebat oleh polisi dan militer. Sebagian besar yang tertangkap dilempar ke dalam truk-truk dan dibawa ke pos-pos polisi di sekitar Dili atau ke Korem dan Kodim di Dili.⁷¹⁵ Beberapa orang yang terluka parah dibawa dengan truk ke rumah sakit militer Wira Husada di Lahane. Pemukulan dilaporkan terjadi selama perjalanan,⁷¹⁶ bahkan juga di rumah sakit.⁷¹⁷ Setelah mendapat perawatan medis dasar, sebagian besar tahanan dikirim ke pos polisi, dan di sana diputuskan siapa yang akan tetap ditahan. Uskup Belo berhasil membebaskan beberapa orang,⁷¹⁸ namun yang lainnya ditahan untuk waktu yang lebih lama. Komisi juga mendengar bahwa beberapa orang, umumnya pemimpin gerakan klandestin, dipindahkan ke distrik lain untuk memutus semua hubungan dengan gerakan Resistansi.⁷¹⁹ Amnesty International memperkirakan jumlah orang yang ditahan setelah peristiwa itu kurang-lebih 300.⁷²⁰

558. Beberapa orang yang berhasil meloloskan diri dari perkuburan itu dikejar oleh anggota Brimob atau militer dan tertangkap di bagian lain Dili. Mereka melacak yang lainnya hari itu juga. Pedro Amaral menuturkan kepada Komisi bagaimana dia berlari menuju daerah Mercado Lama untuk naik angkutan umum, tapi kemudian tertangkap oleh dua anggota Brimob dan dua anggota polisi. Mereka memukulinya dengan tangan dan senjata SKS. Ia ditahan selama dua malam di Polres sebelum dipindahkan ke Polwil dan ditahan selama satu minggu, di mana ia tidak mengalami penganiayaan. Ia kemudian menjalani tiga bulan di Penjara Becora, sebelum kemudian dibebaskan. Selama minggu pertama di Becora ia tidak diberi makan.⁷²¹

559. Simplicio Celestino de Deus, seorang anggota klandestin, ditangkap di perkuburan itu setelah penembakan para demonstran selesai. Dia mengatakan kepada Komisi:

.....
* Menurut Laporan Khusus Tentang Pengungkapan Para Perusuh yang Terlibat dalam Peristiwa Demonstrasi 12 November 1991 di Santa Cruz, Dili, Timor Timur, tertanggal Desember 1991 (tidak ada tanggal yang tercantum) ditandatangani dan dicap oleh Komando Pelaksana Operasi Timor Timur (Brigadir Jenderal Rudolf Warouw)...253 orang dibebaskan pada hari yang sama, tujuh orang dibebaskan delapan hari kemudian, 11 orang dibebaskan 12 hari kemudian, 10 orang dibebaskan 15 hari kemudian. Dokumen ini menyebutkan bahwa 22 'ditahan', yang berarti untuk masa yang lebih lama, yang berbeda dari versi Asia Watch (Asia Watch, Remembering History in East-Timor: The Trial of Xanana Gusmão dan a Follow-up to the Dili Massacre, April 1993, Vol.5, No.8) yang menyatakan bahwa 32 orang ditahan dan delapan orang dari mereka diadili di Dili pada Juni 1992 dan menerima hukuman mulai dari lima tahun delapan bulan sampai penjara seumur hidup (Asia Watch menggunakan laporan ICJ, "Tragedy in East Timor: Report on the Trials in Dili and Jakarta", Jenewa, Swiss, 1992.) 24 lainnya menjadi 'tahanan pembinaan', lihat pembahasan dalam kotak tulisan setelah paragraf 561 di bawah ini.

Sementara itu berada di dalam kuburan Santa Cruz, saya juga berusaha untuk mencari tempat persembunyian. Tak lama kemudian aparat militer mulai menerobos ke dalam kuburan sambil menginjak dan memukuli korban yang telah berjatuh dengan senjataapi mereka. Pada akhirnya saya ditangkap. Salah seorang anggota ABRI dari Batalion 303 memotong telinga kiri saya hingga berdarah. Mereka mulai menyiksa dan menganiaya [memukuli] saya. Tidak lama kemudian seorang polisi yang bernama T443 yang berasal dari Hatolia berpangkat Kopral mengiris telinga kanan saya hingga putus dan kedua tangan saya diborgol. Darah terus mengalir.

Ketika aku tengah disiksa, aku mendengar suara teriakan aparat “Jangan siksa dia karena komandan perlu dia”. Kemudian mereka menarik aku secara kasar keluar dari kuburan Santa Cruz dan menaikkan aku ke dalam mobil Hino yang penuh dengan mayat dengan jumlah 50 sampai 60 orang. Padahal banyak darah aku yang mengalir di tubuh dan mataku. Kemudian aku bersama rekan-rekan di rawat di Rumah Sakit Wira Husada Lahane selama sembilan hari.⁷²²

560. Simplicio de Deus kemudian ditahan di Polwil di Comoro.

561. Komisi telah menerima sejumlah pernyataan yang menunjukkan bahwa militer menangkap orang-orang, tidak hanya di Dili tapi juga di Distrik Liquiçá, Bobonaro, dan Baucau setelah demonstrasi dan pembantaian di Santa Cruz.⁷²³ Sebagai contoh, masyarakat di Venilale (Baucau) dan Vemasse (Baucau) menggambarkan bagaimana militer meningkatkan patroli di malam hari dan mulai menargetkan orang-orang, biasanya laki-laki muda yang mereka curigai menghadiri demonstrasi.⁷²⁴ Komisi juga mendengar tentang dua orang di Desa Uatu-Haco (Venilale, Baucau) yang disiksa.⁷²⁵ Di Quelicai (Baucau), anggota-anggota kelompok paramiliter yang berhubungan dengan ABRI, Tim Saka, membantu penangkapan orang-orang yang dicurigai.⁷²⁶

Tahanan pembinaan

Pihak militer mencoba berbagai cara untuk menumpas gerakan klandestin. Pada awal 1980-an, para anggota klandestin dikucilkan dari jaringan klandestinnnya ke Pulau Ataúro atau ke penjara-penjara di Indonesia dan disekap secara *incommunicado*. Beberapa yang lain dipindahkan dari desa asalnya dan ditempatkan di desa-desa yang baru dibangun, seperti Dotik (Alas, Manufahi) atau Bonuk (Hatu Udo, Ainaro), jauh dari keluarga dan teman-temannya. Pada 1990-an para anggota resistansi kota yang terlibat dalam demonstrasi-demonstrasi juga dipindahkan dari kota asalnya ke perdesaan untuk

memisahkan mereka dari anggota jaringan klandestin lainnya.^{*} Beberapa dikirim untuk “ditatar kembali” yang biasanya melibatkan kerja paksa bagi militer untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Ini merupakan pengalaman Simplício Celestino de Deus dan lima rekannya, Filomeno Gomes, Fernando Tilman (Gulit), Renilde Guterres, José Bento, dan José Belo, yang semuanya ditangkap setelah demonstrasi Santa Cruz pada 1991. Setelah pada awalnya ditahan di Polda Dili bersama tahanan lainnya, mereka diberi tahu akan dibebaskan setelah menghadiri misa Pastor Brito. Akan tetapi truk yang mereka kira akan membawa mereka ke misa justru membawa mereka ke Distrik Lautém. Mereka ditahan di Kodim Lautém selama sehari, kemudian di markas Kostrad di Illiapa, Loré II (Lospalos, Lautém) selama dua hari. Selanjutnya, Simplício dan Filomeno Gomes dipisahkan dari yang lainnya dan ditahan di markas Linud Kostrad di Alapupulu (Lospalos, Lautém), di mana mereka diinterogasi mengenai jaringan klandestin dan diminta menyebut nama. Setelah kurang-lebih empat bulan keenamnya bertemu lagi di *base camp* di Lospalos.⁷²⁷

Di *base camp* ini para tahanan diharuskan bekerja siang-malam tanpa dibayar, menanam tanaman pangan untuk para prajurit pada siang hari, dan menjaga kamp di malam hari. Simplício menjelaskan bahwa mereka menggarap tanah selama 12 jam sehari antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00 dengan sarapan pagi sebentar dan istirahat makan siang selama 15 menit. Mereka akan dipukuli bila terlambat. Pada pukul 18.00 mereka mandi, makan, dan istirahat dan pada pukul 21.00 mereka bergantian jaga malam sampai pukul 06.00.

Orang-orang yang ditahan seperti ini kadang disebut ‘tahanan pembinaan’.[†] Asia Watch melaporkan bahwa para tahanan seperti ini ditempatkan di bawah kuasa unit-unit teritorial di wilayah perdesaan di mana mereka bekerja di bawah pengawasan prajurit dalam proyek pembangunan desa.⁷²⁸ Jenderal Theo Syafei dilaporkan pernah mengatakan kepada Asia Watch bahwa bentuk penahanan seperti ini bisa tidak memiliki batas waktu, walaupun para prajurit pengawas diberi “target” untuk menyelesaikan pembinaan para tahanan di bawah tanggungjawabnya. Jawaban yang dilaporkan pernah diberikan oleh seorang perwira intelijen senior ketika ditanya apakah para tahanan ini akan didakwa dan diadili adalah: “belum tentu”.⁷²⁹

* Setelah penangkapannya pada 23 Januari 1991, José Manuel da Silva Fernandes dipindah-pindahkan di antara berbagai tempat penahanan seperti Senapati I (Dili), Nusra Bhakti (Dili), Rumah Merah (Baucau), Kotis, markas Batalion 413 (Manuboe, Ossu), Kodim Viqueque, dan akhirnya di *base camp* di Viqueque, di mana ia menjadi tahanan luar selama dua tahun. (CAVR, Wawancara dengan José Manuel da Silva Fernandes, Dili, 20 Desember 2004.)

† Asia Watch, April 1993, Vol. 5, no. 8, hal. 22. Anggota keluarga Simplício yang mengunjunginya memang diberitahu bahwa ia bukan narapidana, melainkan tahanan pembinaan.

Simplicio Celestino de Deus menggambarkan bagaimana dua perwira militer dari Jakarta mengunjunginya setiap tiga bulan. Mereka akan berbicara padanya untuk menilai kondisi psikologisnya. Mereka akan menanyakan hal-hal seperti: “Dalam lima tahun kamu mau jadi apa? Apa yang menurut kamu akan terjadi di masa mendatang? Menurut kamu kenapa ini terjadi kepada kamu?” Simplicio percaya bahwa ia diizinkan pulang pada 1993 karena pengunjung-pengunjung ini mengirimkan laporan yang menguntungkan dirinya ke Jakarta.⁷³⁰

Kunjungan delegasi Portugis yang dibatalkan

562. Pada November 1991 itu juga militer dan agen-agen Indonesia lainnya menangkap pendukung prokemerdekaan yang telah mengadakan persiapan untuk menyambut kunjungan delegasi parlemen Portugal ke Dili dan distrik-distrik lainnya.⁷³¹ Contohnya pada 15 November 1991 di Cailaco (Bobonaro) Komandan Koramil Sersan Mayor T451 menangkap sepuluh pemuda yang bersiap-siap menyambut kunjungan Parlemen Portugal ke Cailaco. Salah seorang yang tertangkap, Adriano João, kemudian dibawa ke Kodim Maliana 1636. Sersan Intel T452 dan kepala intelijen, T453, kemudian menginterogasi Adriano João selama tiga hari. Selama interogasi ia dipukuli dan disengat listrik. Adriano menggambarkan bagaimana pada suatu malam tentara yang mabuk membangunkan tahanan dan memerintahkan mereka melucuti pakaian dan tidur telanjang di atas lantai. Makanan yang dibawa ke Kodim oleh anggota keluarga ditahan.⁷³²

563. Julio Araújo Martins menuturkan kepada Komisi bahwa seorang anggota Kopassus bernama T454 menangkap dia di rumahnya di Ermera pada 17 Desember 1991 pada pukul 09.00 karena ia telah membuat spanduk untuk kunjungan delegasi Portugal ke Ermera dan juga karena ia ikut dalam demonstrasi Santa Cruz sebelum sebelumnya. Komandan Koramil Ermera dan empat orang lainnya membawa dia ke Kodim di mana ia ditahan di sana selama empat bulan. Selama itu, T454 dan dua Babinsa dari Bobonaro, T455 dan T456, dari Bobonaro memukuli dan menamparnya serta menyiksanya dengan sengatan listrik.⁷³³

Bangkitnya milisi, 1985-1998

Seperti yang digambarkan dalam bagian sebelumnya mengenai Profil Pelanggaran: 1985-1998, fase konflik politik ini ditandai dengan meningkatnya kerjasama antara militer Indonesia dan berbagai kelompok milisi Timor yang baru muncul serta kakitangan militer Indonesia (lihat Bagian 4: Rezim pendudukan, bagian tentang militerisasi masyarakat Timor-Leste) dalam penahanan, penganiayaan, dan penyiksaan warga sipil.

Sebagian besar kelompok milisi dibentuk di tingkat kabupaten oleh Kopassus yang merekrut pemuda Timor dari distrik-distrik. Pola umum yang diidentifikasi Komisi adalah peningkatan penangkapan di distrik-distrik tertentu dalam bulan-bulan setelah kelompok milisi baru dibentuk. Kelompok-kelompok milisi ini antara lain: Tim Alfa (Lospalos), Tim Sera (Baucau) pada 1980-an, Tim Saka (Baucau) pada 1983, serta Tim Sukarelawan (Ainaro) pada 1991.⁷³⁴

Sejumlah besar penangkapan dilaporkan kepada Komisi dikaitkan dengan Tim Sukarelawan, yang beroperasi di Ainaro (sejak 1991), Tim Saka di Baucau (sejak 1991), dan Halilintar di Bobonaro (sejak 1994).

Halilintar

Menurut pernyataan-pernyataan yang diterima Komisi dan Profil Komunitas Atabae (Bobonaro), pada September 1994 pihak militer di Atabae mendengar dari seorang informan bahwa ada kegiatan klandestin di Desa Atabae Lama. Militer kemudian mulai membentuk sekelompok pemuda yang belakangan menjadi milisi Halilintar. Sebuah operasi penangkapan besar-besaran dilakukan di wilayah itu yang mengincar pemuda yang dicurigai terlibat dalam kegiatan klandestin.* Di akhir November setidaknya 50 orang telah ditahan dan dibawa ke Koramil.⁷³⁵ Mereka dipukuli dan disiksa di selnya.⁷³⁶ Baik SGI, anggota Koramil, seperti komandan T457 dan kepala desa T458, terlibat dalam penangkapan-penangkapan.⁷³⁷ T457 mengotorisasi penangkapan-penangkapan ini dan terlibat sendiri dalam penyiksaan tahanan.⁷³⁸ Kodim 1636 Maliana juga menahan penduduk Desa Fatubessi.⁷³⁹

João da Silva dari Fatubessi (Hatolia, Ermera) menceritakan kepada Komisi bagaimana pada 1994, ia dan 62 orang lain yang ia tidak kenal ditangkap di Atabae karena dicurigai berhubungan dengan Falintil. Ia mengatakan bahwa ia ditahan oleh anggota Halilintar T459 dan dipukuli, kemudian dibawa bersama tahanan lain ke Loes (Atabae, Bobonaro). Para tahanan disekap di Loes selama tiga bulan dan wajib melapor setiap hari sebelum diizinkan pulang.[†]

Setahun kemudian, menurut masyarakat Atabae, T1 dan anggota SGI di Atabae membentuk kelompok milisi Halilintar yang terus menahan pemuda-pemuda yang dicurigai terlibat klandestin. Banyak orang ditangkap dan dipukuli, terkadang dengan begitu kejam hingga wajah mereka tidak dapat dikenali lagi.⁷⁴⁰

* Komisi mendapat kesaksian bahwa pengaktifan kembali kelompok Halilintar digunakan dalam penculikan dan penghilangan pendukung prokemerdekaan. (CAVR, Profil Komunitas Desa Atabae, Subdistrik Atabae, Distrik Bobonaro. Lihat juga Pernyataan HRVD 1181.)

† Lihat Pernyataan HRVD 1200. Penangkapan massal ini dibenarkan oleh Domingos Soares yang berkata bahwa ia dan para anggota klandestin yang lain dipaksa mengikuti upacara (mungkin upacara bendera Indonesia) pada tanggal 17 setiap bulan selama satu tahun setelah mereka ditangkap Halilintar (Pernyataan HRVD 1181).

Tim Sukarelawan

Beberapa tahun sebelumnya, pada 1991, Tim Sukarelawan dibentuk di sebuah desa kecil di Distrik Ainaro.* Menurut berbagai sumber, tim ini dimaksudkan untuk mengumpulkan para pemuda untuk mengadakan demonstrasi tandingan yang mendukung integrasi ketika delegasi parlemen Portugis melewati Ainaro,⁷⁴¹ untuk menumpas gerakan klandestin,⁷⁴² dan untuk mencegah pemuda Ainaro bergabung dalam demonstrasi Santa Cruz.†

Statistik

Tindakan-tindakan Tim Sukarelawan bertanggung jawab pada memuncaknya jumlah kejadian penahanan di Ainaro pada 1991 dan 1992. Dari hanya dua kasus penahanan yang dilaporkan kepada Komisi dari 1990, Komisi menerima 390 pernyataan mengenai kejadian pada 1991. Juga terdapat 219 insiden penganiayaan yang dilaporkan dan 201 penyiksaan. Pada 1992, jumlah penahanan yang dilaporkan menurun kembali menjadi 19 dengan hanya tiga kasus penyiksaan dan 13 penganiayaan.

Penahanan dan penyiksaan

Pada awalnya Tim Sukarelawan hanya menahan orang-orang yang menolak bergabung dalam mereka⁷⁴³ tapi tak lama kemudian mereka juga mulai mengincar warga sipil atau komunitas manapun yang dicurigai terkait dengan Resistansi. Masyarakat melaporkan penangkapan besar-besaran di desa dan kota-kota di Ainaro termasuk: Maulau (50 orang), Cassa (26 orang), Manelobas (97 orang), dan Manetu (55 orang).⁷⁴⁴ Para tahanan disekap di bermacam-macam fasilitas penahanan termasuk instalasi militer seperti Koramil Maubisse, gedung-gedung umum seperti Gedung Integrasi di Cassa, kantor desa di Manetu, Aitutu, dan Manutasi, dan kantor camat T461.⁷⁴⁵ Kediaman pribadi kepala desa T462 juga disebut sebagai tempat penahanan. Ini menunjukkan bahwa Tim Sukarelawan bekerjasama dengan baik militer Indonesia maupun pemerintahan sipil, atau setidaknya dengan sepengetahuan kedua institusi tersebut.

Sebagian besar tahanan disekap selama beberapa hari tapi sebagian lagi ditahan sampai empat bulan lamanya, khususnya mereka yang ditahan di Koramil Maubisse. Banyak yang terus menjalani

* Menurut masyarakat Manutasi, Tim Sukarelawan dibentuk di Mau-Ulo II, Fatuk Maria, Desa Manutasi, di mana tim itu mendirikan "pos besar" pertamanya. Organisasi hak asasi manusia Timor, Yayasan Hak, melaporkan bahwa Tim Sukarelawan merekrut di antara anak-anak mantan pemimpin Apodeti dan bahwa kelompok ini dipimpin oleh T466.

† CAVR, Profil-profil Komunitas Desa Maulau (26 Mei 2003), Desa Manelobas (23 Mei 2003), dan Desa Manetu (8 Juli 2003), Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro. Peningkatan jumlah penahanan dilaporkan pada 10-11 November 1991, sehari menjelang demonstrasi Santa Cruz.

interogasi dan penyiksaan di tangan Tim Sukarelawan dan ABRI. Di Maulau (Maubisse), campuran cabai dan air dioleskan ke mata tahanan. Di Manelobas (Maubisse) kepala desa, Cecilia Xavier, dibungkus dengan bendera dari kepala sampai kaki dan diancam akan dibakar hidup-hidup.⁷⁴⁶ Di Manetu (Maubisse), Manutasi (Ainaro), dan Cassa (Ainaro), para perempuan diperkosa atau diancam akan diperkosa.⁷⁴⁷

Sukarelawan dan pihak militer

Bukti lebih lanjut keterkaitan antara Sukarelawan dan pihak militer adalah pembagian tugas yang jelas di antara keduanya. Beberapa anggota Sukarelawan ditugaskan menangkap orang, biasanya dalam kelompok lima orang atau lebih. Mereka kemudian akan menyerahkan korbannya kepada anggota Sukarelawan yang lain atau kepala intelijen militer yang akan menginterogasi korban. Interogasi berfokus pada keterlibatan korban dalam kegiatan klandestin dan kontak dengan Falintil. Anggota Sukarelawan lainnya, Babinsa, atau bahkan kepala desa, kemudian akan menyiksa korban. Penangkapan, penahanan, dan penyiksaan seperti ini biasanya diperintahkan oleh para komandan Sukarelawan, seperti T463, T464, T465, atau “pemimpin tertinggi” T466 dengan restu dari militer. Pedro Sarmento mengingat:

Pada 1991, pukul 3 sore datanglah anggota-anggota Sukarelawan T468, T469, dan T470, menangkap saya di rumah saya. Saya dibawa ke Gedung Integrasi di Cassa. Di sana, saya ditampar oleh T471 atas perintah T472...Lalu saya bangun dan diinvestigasi oleh T473, saya ditendang di telinga hingga berdarah, lalu dimasukkan dalam Gedung Integrasi selama tiga hari tiga malam. Saya diinterogasi, dipukul, dan ditendang terus-menerus. Lalu saya diikat dengan kawat oleh T474 dan T475. Setelah itu saya dilepas pulang ke rumah.⁷⁴⁸

Moizes Mendonça Doutel Sarmento mengatakan kepada Komisi:

Pada 1991, kepala desa Manetu, T462, dan Komandan KOMPI Sukarelawan T477 membawa saya...ke dua orang Nanggala Kopassus yang menginterogasi saya mengenai bendera nasional [Fretilin]. Setelah saya memberi informasi, anggota Sukarelawan T478, T479, T480, dan T481 mulai memukul dan meninju wajah saya. Sorenya jam 5, Babinsa T482 dan dua orang anggota Kopassus datang dan memasukkan saya dan Abel Mendonça ke dalam air lalu disuruh tidur melihat Matahari. Kedua anggota Kopassus tersebut menaruh batu besar di atas dada kami baru kemudian kami diinterogasi. Saya dan Abel Mendonça dalam air selama satu jam. Setelah itu, mereka menyuruh kami keluar dari air lalu kami berdua diinterogasi lagi. Abel Mendonça disuruh pulang sedangkan saya ditahan di Koramil selama satu bulan. Babinsa T482 menyuruh saya dan teman-teman

tahanan lain untuk membuat kandang babinnya. Setelah itu kami disuruh pulang ke rumah namun masih disuruh wajib lapor satu kali dalam seminggu dan harus membawa kayu bakar untuk ABRI.⁷⁴⁹

Kerja paksa

Setelah dibebaskan, korban sering dipaksa melakukan kerja paksa termasuk membangun rumah baru bagi kepala desa Manetu, T462, menjaga pos Sukarelawan, membersihkan kebun Koramil, atau membangun pagar baru.⁷⁵⁰ Kerja semacam ini dapat berlanjut sampai setahun setelah “pembebasan”, sehingga mulai akhir 1991 sampai pertengahan 1992 banyak kelompok penduduk di Ainaro yang hidup dalam kondisi pemantauan yang sangat ketat. Menurut masyarakat Manetu, pemantauan tidak lagi dilakukan terhadap penduduk baru setelah penangkapan Xanana Gusmão pada November 1992.⁷⁵¹

Pembebasan

Setelah sebagian besar tahanan dibebaskan, Koramil 02 Maubisse diperintahkan oleh Kodim 1633 Ainaro untuk mengumpulkan semua yang dibebaskan dan membawa mereka ke upacara sumpah darah besar-besaran yang diadakan di stadion Ainaro. Masyarakat Manutasi (Maubisse, Ainaro) dan Hohorai Kiik (Ainaro, Ainaro) menggambarkan apa yang terjadi:

Selama sepanjang hari kami menyumbangkan darah secara bersama kemudian kami meminumnya untuk melakukan sumpah bahwa kami tidak akan lagi melakukan aktivitas politik, kami akan selalu hidup di bawah Bendera Merah Putih, dan berjanji mati atau hidup tetap berintegrasi dengan Indonesia.⁷⁵²

Pemimpin kami yang melakukan sumpah adalah Manuel Pereira, kepala Dinas P&K Kabupaten Ainaro. Kami yang melakukan sumpah datang dari empat kecamatan seperti; Hatu-Builico, Maubisse, Hato Udo, dan Kecamatan Ainaro. Jumlah orang secara keseluruhan kurang-lebih 2.150 orang karena dalam lapangan sepak bola dipenuhi oleh manusia. Para pimpinan memaksa kami untuk membunuh kambing, masak, beli tuak, dan menyelenggarakan pesta dan kami diminta oleh para pimpinan untuk kembali ke kecamatan masing-masing agar menjelaskan kepada penduduk yang ada di masing-masing desa bahwa kami memang kepala dua.⁷⁵³

Interogasi dan penyiksaan korban yang berhubungan dengan demonstrasi

564. Penelitian Komisi menunjukkan bahwa penganiayaan dan penyiksaan selama penahanan umum digunakan terhadap para tahanan yang terlibat dalam demonstrasi. Sebuah submisi dari para mantan tahanan politik menyatakan:

Kami menjadi sasaran pemukulan dan dibenamkan ke dalam kotoran manusia. Kerap kali mereka membukakan pintu-pintu untuk para serdadu yang pulang melaksanakan tugas pertempuran di hutan dan membiarkan mereka memukuli kami. Mereka datang saat petang hari dalam pakaian tempur lengkap, lalu mulai memukuli dan meninju kami. Mereka berteriak, “Kami mencari orang komunis. Jadi ternyata mereka ada di sini di Dili, bukan di hutan.”

565. Korban sering disiksa selama interogasi oleh polisi untuk memaksakan pengakuan apabila kelak akan diadili. Sebagai contoh José Manuel da Silva Fernandes, salah satu penyelenggara demonstrasi pada Misa Sri Paus Yohanes Paulus II di Tacitolu yang ditahan beberapa hari setelah kejadian, menuturkan kepada Komisi bahwa kelompok aktivis yang bersembunyi di kediaman Uskup dibawa ke Polwil kemudian dipisahkan satu sama lain. José Manuel dibawa ke Korem dan ditahan di sana selama tiga bulan. Selama itu ia disiksa terus-menerus.⁷⁵⁴ José Manuel menceritakan kepada Komisi bahwa interogasi pada dua minggu pertama bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dasar. Pada saat ini dia dipukuli, ditendang, diserang dengan popor senapan, ditusuk dengan ujung pisau, disundut dengan rokok, dan direndam di tangki penuh kotoran, juga diinjak-injak dan diancam dengan pistol berpeluru.⁷⁵⁵

566. Setelah mendapatkan pengakuan, para interogatornya “menguji” pengakuan yang dipaksakan dengan memberikan dua jenis kejutan arus listrik. Kejutan yang pertama dengan *charger* yang diputar tuasnya, yang kedua dengan kursi metal yang dirancang khusus di mana tahanan yang nyaris telanjang diikat di pergelangan tangan dan kaki dan ditempelkan elektroda ke badannya.⁷⁵⁶ José Manuel menceritakan bahwa penyiksaan ini kadang-kadang berlangsung sampai 15 menit lamanya dan bisa dilakukan tiga kali sehari.⁷⁵⁷ Lima prajurit Kopassus membantu penyiksaan ini di bawah perintah Kolonel Kopassus T449.

567. José Manuel juga melaporkan bahwa selama ia ditahan, Brigadir Jenderal T485, Komandan Kolakops, memukulnya dengan tongkat dan T449 memukuli wajahnya. Dalam suatu interogasi ia disuruh tidak duduk di atas kursi, tapi berjongkok di lantai

.....
* Pernyataan dari Donaciano Gomes dalam Assepol (Associação dos Ex-Prisioneiros Políticos, Asosiasi Mantan Tahanan Politik), *Political Prisoners in East Timor 25 April 1974—September 1999*, Submisi kepada CAVR, hal. 10; Komisi menerima analisis terperinci tentang perubahan pola penahanan dari Assepol dalam kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003. Kutipan di atas termasuk dalam submisi ini, diambil dari sebuah laporan Komisi Hakim Internasional (International Commission of Jurists), 1992:23 [lihat juga Constâncio Pinto dan Mathew Jardine, op cit.].

karena ia “seekor binatang”. Ia juga kemudian dihantam pada lutut dan kepalanya, sering lebih daripada sepuluh kali. Di Korem, petugas-petugas dari institusi yang berbeda-beda menginterogasi dan menyiksanya.⁷⁵⁸

Tabel 10: Tahanan yang ditangkap sehubungan dengan demonstrasi Santa Cruz dan perlakuan terhadap mereka.*

| Nama | Ditangkap | Ditahan | Disiksa | Pelaku |
|---|---|--|---|---|
| José P. Vicente ⁷⁵⁹ | Di rumah di Taibessi (Dili) oleh petugas intelijen. | Korem selama satu hari; Kodim; Rumah Sakit Wira Husada | Di Korem – dihantam dengan popor senapan, ditendang dan dipukuli bertubi-tubi. Di Kodim – sama tapi juga ditusuk di punggung. Ditendang dan dipukuli dalam perjalanan ke rumah sakit kemudian diinterogasi di rumah sakit dan disiksa sampai jahitan lukanya lepas. | Anggota-anggota Korem dan Kodim |
| Francisco Miranda Branco, anggota Komite Eksekutif Front Klandestin. ⁷⁶⁰ | Dipanggil secara resmi oleh Polwil. | Polwil selama 7-8 bulan; kemudian dibawa ke Comarca sesudah proses persidangan. ² | Tidak disiksa. Ia percaya bahwa ini karena perhatian internasional terhadap Indonesia dan karena pihak berwenang menyadari bahwa para tahanan tidak akan mau bekerjasama. | Sekelompok Intel dari Bakin di Jakarta melakukan interogasi terhadap dia. |
| Basilio dos Santos ⁷⁶¹ | Di perkuburan Santa Cruz 12 November 1991 oleh polisi dan ABRI. | Polwil, kemudian pada hari yang sama dibawa ke Kodim selama enam bulan. | Di Polwil dipukuli dengan pistol dan ditendang dengan sepatu bot polisi. Di Kodim disetrum, kuku ditarik keluar dengan tang, bibir disayat dengan pisau silet. | Polisi dan militer. |
| Miguel dos Santos Neves dan teman-temannya Leandro Lobato dan Adolfo ⁷⁶² | Di perkuburan Santa Cruz 12 November 1991 oleh Rajawali | Polwil selama dua minggu. Dibawa sebentar ke rumah sakit Wirahusada untuk dirawat. | Disuruh berjalan di atas duri sampai kaki berdarah, dimasukkan ke sel terbuka di bawah terik matahari. Di rumah sakit diinjak-injak dengan sepatu bot. | Rajawali dan Polisi. |
| Manuel da Conceição ⁷⁶³ | Di perkuburan Santa Cruz 12 November 1991 oleh militer. | Polwil Comoro selama 15 hari bersama banyak orang lain termasuk Aleixo Cobra dan Aleon. | Di perkuburan dipukuli dan ditendang. Di Polwil dipaksa untuk membuka pakaian dan dipukuli, ditinju, dan ditendang selama interogasi yang panjang secara bergilir oleh banyak polisi. | ABRI, kemudian Polisi. |

* Nama-nama berikut hanyalah sebagian kecil orang-orang yang ditahan berkaitan dengan Demonstrasi Santa Cruz yang dilaporkan kepada Komisi. Para tahanan tersebut dipilih untuk melihat variasi perlakuan dari proses penangkapan hingga perlakuan selama penahanan.

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|-------------------|
| Estaquio Pinto ⁷⁶⁴ | Di perkuburan Santa Cruz 12 November 1991 oleh militer. | Polwil membebaskannya atas permintaan Uskup Belo. | Kejut listrik dan pemukulan. Rambut dicukur botak. | ABRI |
| António Fernandes ⁷⁶⁵ | 16 November 1991 oleh militer. | Korem selama dua hari dua malam. | Diinterogasi mengenai kejadian. Dipukuli dan wajahnya disundut dengan rokok. | Tiga anggota ABRI |

568. Melihat variasi perlakuan terhadap tahanan, sulit menemukan strategi yang jelas dalam kaitannya dengan penyiksaan tahanan. Mario Carrascalão menyebutkan bahwa perlakuan terhadap tahanan setelah kunjungan Sri Paus tidak direstui pada tingkat nasional. Ia menceritakan kepada Komisi bahwa ia dan Brigadir Jenderal Mulyadi mengantarkan Benny Moerdani ke bandar udara setelah kunjungan Sri Paus:

Kata Benny kepada Mulyadi: “Mulyadi, jangan macam-macam, ya. Menangkap orang tanpa alasan, jangan lakukan itu.” Tetapi begitu pesawat lepas landas, sementara kami masih ada di bandara, Mulyadi berkata: “Benny bertanggung jawab secara nasional tetapi di Timor Timur saya yang bertanggung jawab.” Mulai hari itu dia melakukan penangkapan-penangkapan.⁷⁶⁶

569. Akan tetapi, jelas tampak adanya koordinasi setidaknya di tingkat provinsi. Seperti ditunjukkan tabel di atas, para tahanan sering ditahan di tempat yang berbeda-beda dan diinterogasi oleh unit yang berbeda, seperti pola penahanan awal pada 1970-an. José Manuel da Silva Fernandes mengatakan bahwa institusi yang berbeda menginterogasi dan menyiksanya menggunakan istilah “bon” atau “saya bon dulu”, yang berarti bahwa satu institusi akan “meminjam” tahanan dari institusi lain agar dapat menginterogasi dan menyiksa mereka.⁷⁶⁷

570. Selanjutnya, walaupun tidak ada perintah tentang bagaimana tahanan harus disiksa, jelas tidak ada batasan terhadap apa yang dapat dilakukan oleh polisi dan militer untuk mendapatkan informasi. Penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak berperikemanusiaan lain, dalam bentuk apapun, sangat umum terjadi sampai dianggap sebagai bagian sistematis dari proses penahanan dan interogasi.

Interogasi setelah demonstrasi Santa Cruz

Gregório Saldanha, satu dari anggota klandestin yang bertanggung jawab mengorganisasi demonstrasi Santa Cruz, ditangkap di perkuburan lalu dibawa ke rumah sakit selama empat hari. Kemudian ia menghabiskan sembilan bulan di kantor polisi di Comoro dan dilanjutkan dengan penahanan di Comarca Balide selama sembilan bulan, lalu di Penjara Becora (Dili), Semarang, dan Cipinang (Jawa, Indonesia). Ia mengatakan kepada Komisi:

Saya langsung ditangkap pada tanggal 12 November pagi di depan kuburan Santa Cruz setelah mengalami [luka] tembak di punggung. Tidak jauh dari samping saya, tentara terus menembak, menghunjamkan bayonet ke tubuh para demonstran...saya berpura-pura meninggal. Sekitar lima menit kemudian, muncul seorang komandan dari Kodim dan memerintahkan anakbuahnya untuk menghentikan aksi penembakan, penikaman, pemukulan. Dan dia juga mengatakan: "Siapa yang masih hidup, angkat tangan!" Dan saya berdiri pada saat itu juga sambil mengangkat ke dua tangan saya...di dalam mobil [truk] itu ada lima orang yang telah meninggal.

Setelah berada di rumah sakit, mereka menendang para mayat yang berada di atas mobil sampai jatuh ke bawah, [dan] kami yang mengalami luka-luka dimandikan setelah itu diberi perawatan. Pada saat itu saya tidak melihat lagi teman-teman yang sempat bertemu dengan saya di dalam mobil. Saya curiga mereka telah dibunuh atau dibawa ke kamar mayat. Setahu saya pada saat itu jumlah kami yang berada di sana sekitar 90-an orang yang mengalami luka-luka dan yang sempat mereka data.

Di kantor polisi, saya langsung bertemu dengan para petinggi kepolisian dan militer untuk menjelaskan kepada mereka bahwa "Saya telah kalian tangkap. Sayalah yang akan bertanggung jawab terhadap peristiwa ini, jadi saya siap menjalani hukuman seberat apapun dan saya minta yang lainnya agar dibebaskan."

Banyak dari pemuda ini yang masih berusia sekolah dan banyak pula yang mempunyai pekerjaan. Akhirnya mereka [aparatus militer] membebaskan sebagian, tetapi yang lainnya masih tetap ditahan. Kebiasaan mereka [aparatus militer] adalah menahan orang-orang yang dicurigai untuk diinterogasi agar mereka bisa mendapatkan data-data baru sebagai bukti untuk penangkapan selanjutnya. Saya terus menuntut [pembebasan para demonstran yang lain] dan hal ini juga saya sampaikan pada saat kedatangan utusan Mahkamah Agung dari Jakarta. Tetapi pada saat saya dihadapkan kepada teman-teman sesama tahanan di kepolisian, mengenai apakah mereka mengenal saya atau tidak, mereka [para demonstran] berkata bahwa mereka

tidak mengenal saya, padahal para tahanan ini adalah teman-teman dekat saya, seperti Simplicio, Marcio, dan lain-lain, dan saya sangat salut dengan keberanian mereka. Mereka tidak hanya berani dalam berbuat tetapi mereka juga berani bertanggung jawab.

Kalau proses interogasi berlangsung maka penyiksaan merupakan salah satu bagian dari proses ini. Karena konsep mereka adalah bahwa tanpa ditekan sulit untuk mendapatkan pengakuan. Ada banyak pengalaman bahwa tidak gampang mereka mendapatkan pengakuan saya, kebanyakan pengakuan saya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kami mendapatkan keuntungan karena peristiwa 12 November menjadi perhatian dunia sehingga kami menjadi pusat perhatian dunia. Karena itulah kami selalu menjadi pusat perhatian. Pada saat tertentu mereka melakukan tekanan terhadap saya, mereka mengambil saya pada malam hari untuk diinterogasi dan disiksa, tetapi pada saat-saat tertentu mereka harus lunak. Karena di kepolisian proses interogasi tidak hanya berlangsung secara formal, tetapi setiap kelompok bisa melakukan interogasi sesuai dengan kemauannya, kadang ada kesatuan dari SGI dan kesatuan lainnya yang melakukan interogasi terhadap saya. Ini kadang membuat saya begitu pusing. Mereka tidak pernah membiarkan saya tenang.

Satu hal yang sangat memalukan adalah ketika Wakil Kapolwil memanggil saya di depan utusan Mahkamah Agung, dari POM, dari Kejaksaan. Semua pejabat ini mengajukan pertanyaan kepada saya, tetapi mereka mengajukan pertanyaan secara maraton. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang pejabat, dengan seketika mereka mengajukan pertanyaan lain, sehingga saya tidak diberi kesempatan untuk menjawab. [Dan] Pertanyaan yang mereka ajukan biasanya tidak terarah dan itu menyebabkan saya sering salah dalam memberikan jawaban. Karena saya membantah tuduhan yang mereka lemparkan kepada saya, maka pada saat itu juga saya langsung ditampar oleh Wakapolwil, karena dia kelihatan begitu marah. Peristiwa itu saya beberkan di persidangan karena seorang pejabat polisi tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan fisik terhadap seorang tahanan. Ada yang memukuli saya, tetapi ada juga yang mencoba menunjukkan rasa kemanusiaan mereka dengan mengatakan bahwa “Sebaiknya kamu memberikan keterangan yang benar agar kamu tidak mendapatkan siksaan lagi.” Dan saya pikir itu hanyalah taktik mereka untuk mendapatkan jawaban yang benar dari saya.⁷⁶⁸

Demonstrasi di Jakarta, 19 November 1991 dan penangkapan-penangkapan di Bali

571. Sekitar tahun 1990-an terjadi penangkapan-penangkapan terhadap para anggota klandestin Timor-Leste di Indonesia. Namun perlakuan yang mereka terima umumnya lebih baik, baik dalam hal proses maupun dalam perlakuan fisik terhadap mereka, dibandingkan dengan tahanan di Timor-Leste. Walaupun demikian, penahanan-penahanan tersebut tetap merupakan pelanggaran terhadap hak-hak mereka untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat secara bebas (lihat Bab 7.6: Pengadilan politik).

572. Demonstrasi politik besar-besaran pertama oleh para pelajar asal Timor-Leste di Jakarta diadakan seminggu setelah peristiwa Santa Cruz, yakni pada 19 November 1991.* Sekitar 100 pelajar menggelar demonstrasi damai di pusat Jakarta untuk mengenang mereka yang telah terbunuh serta sebagai protes atas tindakan pihak militer Indonesia. Para demonstran menyerukan slogan-slogan prokemerdekaan, memajang spanduk-spanduk, dan mengantarkan petisi kepada perwakilan PBB serta kedutaan Australia dan Jepang. Isi dari poster-poster dan petisi tersebut tidak hanya merujuk kepada pembantaian Santa Cruz namun juga terhadap invasi dan pemaksaan integrasi Timor-Leste ke dalam Indonesia.

573. Polisi menangkap sekitar 70 dari para demonstran dan menahan mereka, mulanya di Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) di Jakarta. Polisi dari markas besar, anggota-anggota militer yang berbasis di Timor-Leste, dan Kopassus menginterogasi para tahanan tersebut. Setelah tiga hari, para tahanan dipindahkan ke Markas Besar Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) dan tetap berada di sana selama tiga bulan.⁷⁶⁹

574. Lima hari setelah demonstrasi, pada 24 November 1991, polisi menangkap enam orang anggota klandestin asal Timor-Leste di Denpasar, Bali: Fernando de Araújo (Lasama), José Pompeia, Anito Matos, Aniceto Guterres Lopes (ditangkap tiga hari kemudian), José Paulo, dan Clemente Soares. Penangkapan-penangkapan tersebut mungkin didasarkan pada informasi yang diperoleh dari interogasi terhadap para tahanan di Jakarta. Mereka dicituk dari rumah kos mereka dan ditahan di markas besar Polda Nusra di Denpasar, Bali, sampai 30 Desember 1991. Aniceto Guterres dan José Paulo kemudian dibebaskan dan Fernando de Araújo, dengan kedua tangan terborgol, diterbangkan menggunakan pesawat militer ke Jakarta, di mana mereka bergabung dengan rekan-rekan mereka di Polda Metro Jaya. José Pompeia, Anito Matos, dan Clemente Soares tetap ditahan di Polda Nusa Tenggara.

* Satu aksi sebelumnya di Jakarta, walaupun tidak berhasil, adalah upaya oleh beberapa mahasiswa Timor-Leste untuk mencari suaka pada 1987. Demonstrasi-demonstrasi diadakan di daerah-daerah lain di Indonesia sebelum ini, seperti demonstrasi di Universitas Udayana di Bali pada 13 Maret 1991. Amnesty Internasional melaporkan bahwa lusinan mahasiswa ditangkap pada demonstrasi ini termasuk enam orang mahasiswa Timor-Leste yang ditahan semalam: Alexandro Corte-Real, Manuel Sarmento, Boaventura da Silva, José Celestino, Lorenzo, dan Miguel Ximenes. (AI Index: ASA 21/04/91).

575. Virgilio Guterres mengatakan kepada Komisi bahwa ia tidak mendapat siksaan selama masa penahanannya.

Mungkin salah satu alasannya adalah bahwa ketika kami ditangkap, pemerintah Indonesia telah di bawah tekanan yang luarbiasa waktu itu. Karena video hasil rekaman Max Stahl telah dipublikasikan di seluruh dunia mengenai tragedi 12 November, sehingga Indonesia di bawah tekanan internasional waktu itu. Tindakan-tindakan yang mereka tunjukkan pada kami waktu kami ditahan di Jakarta mungkin salah satu tahap bagi mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa memperlakukan kami dengan baik, untuk membantah isu pelanggaran HAM yang telah santer terdengar di mana-mana, dan untuk memberi kesan bahwa mereka tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan di Timor Timur seperti yang dituduhkan kepada mereka. Mungkin di Dili karena kurangnya akses terhadap komunikasi dari luar, sehingga penyiksaan-penyiksaan keras terjadi. Sementara di Jakarta, kita hanya mengalami kesulitan akses informasi ke dunia luar pada minggu-minggu pertama. Tetapi setelah proses interogasi itu kita mendapatkan kunjungan dari teman, keluarga, bahkan ada beberapa teman wartawan, sebagai pengunjung mereka datang untuk melakukan wawancara sehingga aparat Indonesia tidak menerapkan kekerasan dalam mengadakan interogasi terhadap para tersangka.⁷⁷⁰

576. Semua tahanan kemudian dibebaskan setelah tiga bulan di Polda Metro Jaya, kecuali 22 orang yang akan disidang. Domingos Barreto menceritakan bagaimana sebagian dari mereka dibebaskan:

Mereka mulai memisahkan kami karena berdasarkan hasil investigasi itu bahwa ada yang, menurut tuduhan mereka, hanya ikut-ikutan... [Mereka] tetap melakukan investigasi pada tengah malam...kemudian waktu itu kami dipisahkan dari 71 orang itu. 41 orang dibebaskan terlebih dahulu karena berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa mereka itu adalah ikut-ikutan.⁷⁷¹

577. Dari ke-22 tahanan yang tidak dibebaskan, 17 orang menjadi saksi untuk kelima orang lainnya: João Freitas da Camara, Fernando de Araújo, Virgilio Guterres, Agapito Cardoso, dan Domingos Barreto. Kelimanya didakwa atas tindakan subversi.⁷⁷² Selama sidang, para terdakwa ditahan di Polda Metro Jaya. Kesemuanya diputus bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Empat dari mereka dikirim ke Rumah Tahanan Salemba (Jakarta) sementara João Freitas da Camara dikirim ke Penjara Cipinang (Jakarta). Fernando de Araújo dan Virgilio Guterres kemudian dipindahkan dari Salemba ke Cipinang (lihat Bab 7.6: Pengadilan politik).

Demonstrasi-demonstrasi Untim

578. Setelah penangkapan dan pembunuhan pada 1991, jumlah pemimpin klandestin yang aktif di Timor-Leste berkurang drastis. Walaupun demikian, mulai pertengahan 1990-an para mahasiswa dari Universitas Timor Timur (Untim) mengorganisasi banyak demonstrasi di kampus universitas yang kadang-kadang juga diikuti oleh para siswa SMA.⁷⁷³ Beberapa demonstrasi bersifat spontan, tapi ada juga yang direncanakan secara matang, seperti peringatan tahunan Pembantaian Santa Cruz. Beberapa demonstrasi yang dilaporkan kepada Komisi antara lain:

- Pada Juni 1994, para mahasiswa merespons sebuah insiden yang terjadi di Remexio (Aileu) di mana tentara Indonesia membuang *hosti* (roti seremonial untuk jamuan misa) ke lantai dan menginjak-injaknya di sebuah gereja desa. Menurut sebuah laporan dari media, sekitar 300 mahasiswa Timor mencoba mengadakan protes namun digagalkan dan sebagian besar dari mereka ditangkap.⁷⁷⁴
- Pada 9 Januari 1995 sebuah demonstrasi di Untim berubah menjadi kerusuhan ketika para demonstran, anggota-anggota polisi, dan TNI saling melempar batu.⁷⁷⁵ Antara 26 sampai 30 orang kemudian ditahan di tempat kejadian dan dibawa ke Polwil Comoro. * Ketika dalam penahanan, anggota-anggota Brimob memukuli para mahasiswa tersebut sampai babak belur, menelanjangi mereka, dan menyetrum mereka. Sebagian dari mereka kemudian dibebaskan setelah 11 hari, sementara lainnya disidang, dijatuhi hukuman, dan ditahan di Penjara Becora.⁷⁷⁶
- Pada 14 November 1997, demonstrasi Untim lainnya berubah menjadi kerusuhan setelah terjadi adumulut antara mahasiswa dan dua anggota militer berpakaian sipil. Pengamat independen luar menemukan penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh polisi dan juga anggota-anggota Batalion 744 dan 511 yang turut bergabung. Lima mahasiswa kemudian dirawat di rumah sakit, beberapa dari mereka menderita luka tembak.⁷⁷⁷ Setidaknya 11 orang kemudian ditahan⁷⁷⁸ dan enam dari mereka disidang dengan dakwaan pasal 170 (Kekerasan terhadap orang lain dan harta benda) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas dugaan penyerangan terhadap tiga orang anggota Batalion 511, Unit C.

SARA dan kerusuhan

579. Penangkapan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan dilaporkan terjadi pada 1990-an sehubungan dengan insiden-insiden yang digolongkan oleh aparat keamanan Indonesia sebagai kasus SARA (suku, agama, ras, antargolongan). Walaupun insiden-insiden spontan yang dilakukan oleh pemuda Timor ini tidak

* Antara lain: Inacio de Jesus Santos Oliveira, José A. Beto, José Pinto, Paulo Amaral, Luis Tavares, João Manuel, Lemos, Carlos, José Henrique, Alfredo Lopes, Crispin, Apolito, Mário Pinto, Bendito Salo, Filomeno, Zito L. Barreto, dan Alexandrino. (Pernyataan HRVD 5674 dan 6982-2.)

selalu berhubungan langsung dengan konflik politik, pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi memberikan kesan bahwa kedua belah pihak dalam konflik politik ini sesungguhnya menggunakan insiden-insiden tersebut untuk kepentingan masing-masing. Para pendukung kemerdekaan menggunakannya sebagai dasar untuk melakukan demonstrasi menentang pendudukan, sementara pihak militer dan polisi Indonesia menggunakannya sebagai alasan untuk menangkap dan menahan tersangka anggota klandestin dan menginterogasi mereka tentang aktivitas-aktivitas klandestin. Perlakuan terhadap tahanan yang terlibat dalam insiden-insiden ini sering sama kerasnya dengan mereka yang ditahan dalam konteks lainnya.

580. Salah satu alasan munculnya keresahan sosial semacam ini, terutama dalam bentuk konflik antara kelompok-kelompok pemuda, adalah semakin maraknya politisasi pemuda di Timor selama periode ini. Pada 1994 pihak militer mengurangi jumlah batalion yang ditempatkan di wilayah ini sampai dengan tujuh namun menambah kekurangan tersebut dengan membentuk Garda Muda Penegak Integrasi (Gadapaksi, atau sering juga disebut Gardapaksi). Menurut dokumen militer Indonesia, 11.000 orang pemuda direkrut ke dalam Gadapaksi pada 1994.⁷⁷⁹ Milisi-milisi distrik lainnya juga dibentuk pada akhir 1990-an (lihat kotak tentang Tim Sukarelawan, setelah paragraf 563 di atas), sementara dalam waktu yang bersamaan pemuda-pemuda prokemerdekaan secara terbuka menunjukkan perlawanan mereka terhadap rezim. Berbagai bentuk pemihakan tersebut muncul di berbagai insiden kerusuhan yang mulai memanas pada pertengahan 1990-an.

581. Banyak insiden SARA mengakibatkan demonstrasi, sebagian bahkan meningkat menjadi kerusuhan yang kemudian diikuti oleh meningkatnya penangkapan dan penahanan, penganiayaan, serta penyiksaan tahanan. Beberapa contoh yang dilaporkan kepada Komisi antara lain:

- Bentrokan agama di Uatolari (Viqueque) pada September 1994 antara pemuda-pemuda Protestan dan Muslim melawan pemuda-pemuda Katolik. Latar belakang kasus ini tidak terlalu jelas, tetapi berakhir dengan pembakaran tempat-tempat ibadah Protestan dan Muslim oleh para pemuda Katolik. Sebagian dari para pemuda Katolik melarikan diri, namun Marcelino Duarte Barros dan 10 orang lainnya ditahan oleh anggota Tim Saka. Ia melaporkan penahanan dan penganiayaan yang terjadi kemudian.⁷⁸⁰
- Di Maliana (Bobonaro) pada awal September 1994, seorang petugas penjara bernama Sanusi Abubakar dilaporkan telah menghina ajaran agama Katolik.⁷⁸¹ Para pemuda Katolik dan pendukung gerakan prokemerdekaan lainnya di Maliana melakukan demonstrasi menanggapi insiden tersebut, serta mengancam membunuh Sanusi Abubakar dan membakar pasar Maliana. Polisi, ABRI, dan para anggota Kodim 1636 menahan para demonstran. Sebagian berhasil melarikan diri, misalnya José Soares Vicente yang lari ke Dili.⁷⁸²
- Komisi mendengar kasus-kasus penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan berikut ini:

Tabel 11: Penahanan dan penganiayaan Marcelino Duarte Barros

| Pelaku | Tempat Penahanan | Lama Penahanan | Penyiksaan/penganiayaan |
|---------------------------------|--|----------------|--|
| Tim Saka di bawah Komandan T486 | Markas besar Tim Saka di Quelicai (Baucau) | Tiga hari | Dihantam dengan tongkat besi, ditendang, diinjak, diikat dengan kabel, dan mata ditutup kemudian dipaksa berbaring di bawah terik matahari selama tiga hari. |
| Brimob | Sel di Baucau Kota Baru | Dua hari | Disuruh berbaris dan berlari, lalu dipukuli. Dipaksa minum air yang dicampur air seni. |
| Polisi | Polsek Beloi | - | Dipukuli, ditendang, ditinju, disemprot gas. Diinterogasi polisi tentang hubungan dengan Falintil dan menyediakan makanan untuk Falintil di hutan. |
| Polisi | Polsek Uatolari (Viqueque), dibawa ke sana oleh 12 anggota Brimob. | Satu minggu | Dipukuli, ditinju, dan ditendang oleh petugas Intel Timor, T487. |

Tabel 12: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan di Maliana (Bobonaro)

| Korban | Pelaku | Tempat Penahanan | Lama penahanan | Penyiksaan/penganiayaan |
|--|---|--|---|--|
| Hernani M. de Araújo. Anggota organisasi klandestin Sagrada Familia ⁷⁸³ | ABRI dan polisi. | Kodim 1636 kemudian pos polisi (tidak diketahui) | Satu malam di Kodim, kemudian enam minggu di kantor polisi. | Militer memukuli korban, menyetrumnya, dan mencopot kuku jari tangan dan kakinya dengan tang. Polisi menginterogasinya dan kemudian kembali memukulinya, menyetrumnya, dan menindih jari-jari kakinya dengan kaki kursi. |
| Eduardo Lopes, (Lorico Lopes) ditangkap 18 September 1995. ⁷⁸⁴ | Polisi, Kopral T488 memimpin tim penangkapan. | Kantor polisi. | Dua bulan, kemudian dihukum empat tahun penjara di Penjara Maliana. | Korban dipukuli dan disundut rokok. Ia berkata polisi menarik rosario yang berada di leher tahanan dan mengatakan kepada para tahanan bahwa mereka "melawan negara." |
| Laurentina Amaral ⁷⁸⁵ | - | Kodim 1636 | Tiga bulan. Ia kemudian membayar Rp500.000,00 untuk pembebasannya. | - |
| José P. Vicente, dari Lebos (Lolotoe, Bobonaro)* | Opsir polisi bernama T489 | Polres Maliana. | Satu hari | Dipukuli di kepala dengan pentungan besi. |

* José Vicente, seorang anggota Fretilin, ditangkap lagi oleh Kodim dua tahun kemudian yaitu pada Oktober 1997 karena dicurigai memobilisasi demonstrasi yang membakar pasar. Ia ditahan selama tiga hari, di mana ia ditelanjangi, dipukuli, ditinju, dan ditendang. Kemudian pada 1999, ia ditangkap oleh milisi KMMP di Lolotoe dan ditahan selama satu hari. (Pernyataan HRVD 7157)

- Di Uatolari (Viqueque) pada Februari 1997 sekelompok pemuda prointegrasi menyerang kelompok aktivis gereja.[†] Masyarakat Macadiqui (Uatolari, Viqueque) mengatakan kepada Komisi bahwa orang-orang kemudian turun ke jalan dan bertrok dengan aparat. Bertrokan berlanjut sampai empat hari, sehingga menutup jalan di Macadiqui.⁷⁸⁶ Jumlah orang yang ditangkap dalam insiden tersebut dilaporkan bermacam-macam, mulai dari 70 (oleh Kolonel Mahidin Simbolon, Komandan Korem Timor Timur) sampai 109 orang (oleh Wakil Kapolda Timor-Timur, Kolonel Atok Rismanto).⁷⁸⁷ Semua tahanan dibawa ke Kodim Viqueque dan pos militer di Darabai (Uatolari, Viqueque) di mana mereka diperiksa dan dibebaskan setelah beberapa hari.

Insiden setelah penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian

582. Sejumlah penangkapan terjadi di Dili pada Desember 1996, ketika Uskup Belo kembali ke Timor-Leste setelah menerima Hadiah Nobel Perdamaian bersama José Ramos-Horta. Perayaan nasional diadakan setelah ia kembali,[‡] namun beberapa kerusuhan berdarah terjadi, termasuk pemukulan yang menyebabkan kematian seorang opsir intelijen, Koprak Alfredo Sigamau oleh 26 pemuda Timor. Dilaporkan bahwa para pemuda tersebut percaya bahwa opsir tersebut berencana membunuh Uskup Belo.[§]

583. Sebagai respons terhadap kerusuhan itu, pihak militer Indonesia bersama polisi mulai menangkap orang-orang dan membawa mereka ke Polres Dili, Polda Timor Timur, dan markas SGI di Colmera, Dili. Beberapa dari mereka disidang dan menjalani hukuman di Penjara Becora.⁷⁸⁸ Polisi melaporkan bahwa mereka menangkap 13 orang sehubungan dengan kerusuhan di Dili.⁷⁸⁹

584. Hermenegildo Martins, salah satu dari 26 pemuda yang dikaitkan dalam pembunuhan Koprak Siga, ditahan selama empat bulan setelah insiden tersebut dan dibawa ke Polda Dili. Polisi menginterogasi dirinya tentang pembunuhan tersebut selama tiga hari dan dalam interogasi tersebut mereka menyundutnya dengan rokok. Ia kemudian dipindahkan ke Polres Dili di mana 12 petugas polisi menganiayanya, termasuk menyiletnya di bagian paha. Pada akhirnya ia disidang atas keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut dan dikirim ke Penjara Becora.⁷⁹⁰

* Komunitas Desa Macadiqui di Uatolari (Viqueque) mengatakan pemuda-pemuda itu adalah anggota Gadapaksi. (CAVR, Profil Komunitas Desa Macadiqui, Subdistrik Uatolari, Distrik Viqueque).

† Komisi tidak mendapat bukti yang jelas tentang pertikaian lokal ini, meskipun demikian masyarakat Desa Matohoi di Uatolari (Viqueque) mengatakan kepada Komisi bahwa pertikaian itu berlangsung selama empat hari dan pertikaian melibatkan penduduk desa melawan para aparat Indonesia (CAVR, Profil Komunitas Desa Matohoi, Subdistrik Uatolari, Distrik Viqueque).

‡ CAVR, Profil Komunitas Desa Bidau Santana, Subdistrik Nain Feto/Dili Oriental, Distrik Dili, Di Baucau sebuah demonstrasi besar diadakan pada 25 Desember 1996 (CAVR, Profil Desa Bucoli, Subdistrik Baucau, Distrik Baucau).

§ Menurut Hermenegildo Martins, salah satu pelaku, sepucuk surat ditemukan di dalam saku Koprak Siga yang menyebutkan bahwa: "Siapapun yang berhasil membunuh Uskup Belo akan menerima uang Rp1.500.000." (Pernyataan HRVD 3739).

Kawanan ninja dan kawanan antininja

Selama pertengahan tahun 1990-an, sebagai bagian dari meningkatnya politisasi pemuda, kawanan prointegrasi dan prokemerdekaan mulai terbentuk di Dili. Para Ninja adalah pemuda prointegrasi yang berpakaian hitam-hitam, menutupi kepala dengan tudung hitam, dan menyerang rumah-rumah keluarga prokemerdekaan di malam hari. Walaupun mereka terlihat sebagai kawanan pemuda yang kecewa dan mencari-cari masalah, tampaknya mereka bertindak dengan koordinasi pihak militer untuk menabur ketakutan di kota.⁷⁹¹

Sebagai tanggapan, para aktivis prokemerdekaan membentuk kelompok-kelompok pengamanan untuk melawan serangan-serangan Ninja ini, dan banyak di antara mereka ditahan polisi. Amnesty International melaporkan bahwa antara 18 dan 22 Februari 1995, pasukan polisi dan militer menahan 15 orang di Dili.⁷⁹² Kepala Kepolisian Timor Timur, Andreas Sugiyanto, menyatakan bahwa 14 orang ditahan, 12 di antaranya didakwa melakukan upaya membentuk kelompok-kelompok pengamanan untuk melawan serangan gang Ninja tersebut.⁷⁹³ Pada 25 Maret 1995, seorang agen SGI Timor bernama T491, menangkap dua anggota Ojetil,⁷⁹⁴ Carlito dan Octavianos di Quintal Bot, Dili. Mereka dibawa ke Markas Besar SGI di Colmera dan dituduh terlibat dalam pemotongan daun telinga seorang Ninja.⁷⁹⁵

Komisi menerima satu pernyataan dari kelompok pemuda prointegrasi yang diserang parah oleh pemuda prokemerdekaan, walaupun tidak jelas apakah ini kasus yang dimaksud di atas. Seorang laki-laki Timor (yang tidak mau disebutkan namanya) mengatakan kepada Komisi bahwa pada 13 Februari 1995 ia diculik oleh empat pemuda prokemerdekaan, T492, T493, T494, dan T495. Ia mengatakan bahwa mereka menuduhnya sebagai Ninja dan bekerja untuk SGI. Rumahnya diobrak-abrik, tangannya diikat, dan ia dibawa ke rumah Alves Ribeiro. Di sana, empat pemuda menyayat wajahnya dengan silet, menghantam kepalanya dengan tongkat besi, dan memotong daun telinganya. Mereka kemudian membawanya ke kantor desa Santa Cruz, mengikatnya di tiang bendera, dan menghajarnya sampai badannya bersimbah darah.⁷⁹⁶

Perburuan terhadap para pemimpin Falintil pada 1990-an

585. Para pemimpin Falintil mengendalikan front bersenjata, klandestin, dan diplomatik dari gerakan Resistansi dan karena itu tetap menjadi sasaran utama pihak militer Indonesia selama periode 1985-1998. Hasil penelitian Komisi menengarai bahwa salah satu strategi utama dalam perburuan tersebut adalah penahanan sewenang-wenang, interogasi, dan penyiksaan terhadap siapa saja yang dicurigai

memiliki hubungan dengan para pemimpin tersebut. Walaupun penahanan-penahanan tersebut terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pernyataan dari para korban yang disampaikan kepada Komisi menunjukkan bahwa usaha pihak Indonesia untuk menangkap anggota-anggota Falintil ditingkatkan pada awal 1990-an.

586. Terkadang operasi-operasi tersebut terjadi setelah insiden yang menandakan berlanjutnya pengaruh Falintil di Timor-Leste. Sebagai contoh, ketika pengacara dan wartawan berkebangsaan Australia, Robert Domm, berhasil menemui dan mengadakan wawancara dengan Xanana Gusmão pada 27 September 1990, operasi intelijen besar-besaran dilancarkan untuk menemukan siapa yang mengatur pertemuan tersebut.⁷⁹⁷

587. Di lain waktu, operasi militer dilancarkan secara spesifik untuk menemukan para pemimpin Resistansi. Dalam periode 1991-92, sebagai contoh, operasi kerjasama militer dan paramiliter dilancarkan untuk menemukan Xanana Gusmão.⁷⁹⁸ Pada 1991 pasukan keamanan mencurigai bahwa Xanana Gusmão berada di Ainaro yang berakibat banyak orang di distrik tersebut ditangkap oleh Tim Sukarelawan (lihat boks setelah paragraf 563 di atas).⁷⁹⁹ Pada 1992, dua operasi militer dilaksanakan di Timor-Leste, Operasi Tuntas I (April - September 1992) dan II (Oktober 1992-Maret 1993), termasuk di antaranya penyiapan daftar warga Timor yang dicurigai berhubungan dengan Xanana Gusmão.⁸⁰⁰

588. Penahanan para tersangka biasanya hanya sebentar dan melibatkan interogasi, sering disertai penyiksaan atau penganiayaan. Sebagai contoh, seorang perempuan mengatakan kepada Komisi bahwa ia ditahan pada 1991 di Ainaro karena dicurigai memberikan makanan kepada Falintil. Ia ditahan oleh Tim Sukarelawan dan diinterogasi di Gedung Integrasi di Cassa (Ainaro, Ainaro). Setelah diinterogasi ia dipukuli sampai babak-belur yang mengakibatkan perdarahan dari alat kelaminnya, kemudian dilecehkan secara seksual (diciumi) oleh 38 anggota Tim Sukarelawan. Ia dibebaskan setelah ditahan selama satu malam.⁸⁰¹

589. Bendito da Conceição juga ditahan pada 1991 di Ainaro bersamaan dengan lebih daripada 40 warga sipil lainnya dari Desa Suro Kraik (Ainaro, Ainaro) karena mereka telah berdansa dalam sebuah pesta desa bersama Xanana Gusmão dan pemimpin Falintil lainnya termasuk Adjunto Maufutu, Konis Santana, Riak Leman, dan Abia Monaria. Lima hari setelah pesta tersebut, pada 25 Juli 1991, komunitas tersebut ditahan oleh Nanggala T496, seorang anggota Kopassus, dan dua Milsas, T497 dan T498. Mereka kemudian diinterogasi selama empat jam dan diharuskan menggali lubang dan merawat pekarangan di pos militer selama tiga tahun.⁸⁰²

590. Di Ossu (Viqueque), orang-orang yang dicurigai ditahan pada akhir 1992 oleh Batalion 407 dan 503 dan mereka dibawa ke *base camp* militer di Viqueque dan ke pos Batalion Tempur Teritorial (BTT, nonorganik) di Ossu dan juga ke distrik-distrik lainnya untuk penyelidikan lebih lanjut. Faustino da Silva ditangkap di Ossu bersama tiga orang lainnya. Setelah sebuah interogasi yang kejam di Koramil Ossu di mana semua tahanan dituduh menjadi bagian dari jaringan Xanana Gusmão, mereka semua dipisahkan satu sama lainnya. Faustino dibawa ke barak Kodim Viqueque. Salah seorang temannya yang bernama Rui ditahan selama tiga bulan

di markas besar Batalion 503, sementara Alfredo dan Tomás yang menjadi teman sepenahanannya dipindahkan ke Dili menggunakan helikopter untuk diinterogasi lebih lanjut.⁸⁰³ Juga ada laporan mengenai penangkapan-penangkapan lainnya di Dili terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan kontak dengan Xanana Gusmão. Penangkapan-penangkapan tersebut dilakukan oleh Mayor T499, Komandan Kopassus SGI Colmera, dan oleh Batalion 745 bersama Koramil Becora.⁸⁰⁴

591. Penangkapan-penangkapan lainnya yang berhubungan dengan pencarian terhadap pemimpin-pemimpin Falintil di antaranya:

- Di Distrik Aileu pada 1985, 11 orang dari Liquidoe ditahan oleh anggota Koramil karena dicurigai menyembunyikan anggota-anggota senior Fretilin/Falintil termasuk Xanana Gusmão. Deponen, Celestino Amaral, tidak memberitahukan kepada Komisi tentang lamanya penahanan tersebut.⁸⁰⁵
- Jacinto Moniz asal Fohoren (Fohoren, Covalima) mengatakan kepada Komisi tentang penangkapannya pada 16 Juli 1989 karena dicurigai menyembunyikan Xanana Gusmão. Ketika ia tidak mengakui perbuatan tersebut, ia dipukuli, ditandang, dan dihantam oleh tentara Indonesia di Fohorem.⁸⁰⁶
- Di Ossu (Viqueque) pada 1992, selain melakukan pencarian terhadap Xanana Gusmão, Yonif 407 bersama anggota Tim Makikit dan Tim Rajawali mengincar orang-orang yang dicurigai bekerjasama dengan Komandan Falintil, Falur Rate Laek.⁸⁰⁷
- Di Desa Babulu (Same, Manufahi) pada 1994, beberapa orang ditahan dalam sebuah pencarian gabungan antara Kopassus dan Milas terhadap Riak Leman (Vidal de Jesus), Secretário de Região III. Sebagian dari yang ditahan namanya tercatat dalam daftar orang yang dicurigai terlibat dalam jaringan klandestin pimpinan Riak Leman, kemungkinan besar disiapkan oleh intelijen militer.⁸⁰⁸ Mereka dibawa ke Kodim Manufahi dan Markas Nanggala, kemudian diinterogasi dan disiksa selama tiga hari. Mereka kemudian dibebaskan dengan status tahanan luar selama tiga bulan. Dalam periode ini mereka diharuskan mengangkut tiang-tiang dan memotong rumput untuk membuat rumah-rumah tradisional.⁸⁰⁹
- Di Desa Carau-Balu dan Luca (Viqueque, Viqueque) pada 1994 dan 1997, ABRI dan Rajawali menangkap dan menganiaya orang-orang yang dicurigai melakukan kontak dengan komandan Falintil, Ular.⁸¹⁰
- Warga sipil di Baucau, tempat Komandan David Alex beroperasi sebelum penangkapan dan kematiannya pada 1997, sering ditahan untuk diinterogasi tentang keberadaan pemimpin Falintil tersebut. Sebagian besar hanya ditahan beberapa hari untuk diinterogasi secara seksama di tempat-tempat seperti Hotel Flamboyan, Rumah Merah, dan pos Kopassus Ossu di Viqueque.⁸¹¹ Terkadang penahanan dilakukan terhadap seluruh warga desa. Pada 1994 ABRI dan anggota Tim Saka menahan 24 orang di Desa Guruça (Quelicaí, Baucau) setelah tersebar desas-desus bahwa warga Guruça sempat melakukan kontak dengan David Alex. Mereka dibawa ke Kodim Baucau, di mana mereka ditahan, diinterogasi, dan disiksa selama dua hari.⁸¹²

592. Komisi juga mendengar tentang orang-orang yang dipaksa menolak otoritas para pemimpin Falintil di depan umum. Dalam salah satu kasus, Frederico de Araújo mengatakan kepada Komisi bagaimana tentara dari Yonif Linud 700 menangkap dirinya dan empat orang lainnya pada 1991. Tangan dan kaki mereka diikat dan mereka dibawa ke pos Kopassus di Mau-Ulo (Ainaro), tempat mereka ditahan selama delapan bulan. Frederico berkata bahwa selama dalam penahanan, ia ditendang dan dipukuli dan dalam satu kesempatan dibiarkan di luar rumah dalam keadaan terikat ketika turun hujan selama dua hari dan dua malam. Ia juga dipaksa berjalan di sekitar Ainaro dan berbicara kepada orang-orang bahwa para pemimpin Falintil seperti Xanana Gusmão, Mau Hudo, Mauhunu, dan Venancio Ferras adalah pembohong. Akhirnya istri Frederico menyogok komandan dari sektor B (barat), Thamrin, dengan dua tenun ikat (*tais*), dua ayam, dan sebilah pedang untuk menyelamatkan nyawa Frederico.⁸¹³

Penangkapan Xanana Gusmão

Xanana Gusmão ditangkap pada pukul 04.00, 20 November 1992, di luar sebuah rumah di Lahane (Dili) tempat ia bersembunyi. Penangkapan ini direkam oleh penguasa Indonesia dan mendapat liputan pemberitaan yang luas di Indonesia.⁸¹⁴ Ia kemudian ditahan dalam kondisi *incomunicado* atau terisolir selama 17 hari, sebelum ICRC diizinkan melihatnya. Selama waktu itu, ia dipindah-pindah antara beberapa lokasi sebelum ditahan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jakarta, tempat ia diinterogasi dan mengalami penganiayaan.

Menurut Xanana Gusmão, ia diperlakukan dengan hormat selama penangkapan namun tidak diperlihatkan surat perintah penangkapan. Dari rumah itu, Xanana segera dibawa ke rumah Jenderal Theo Syafei, Komandan Kolakops (Komando Pelaksana Operasi) Timor Timur, ia berada di sana selama dua jam dan dikunjungi oleh Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno. Ia mengatakan bahwa kedua orang itu memperlakukannya dengan hormat. Pada hari yang sama, ia diterbangkan ke Bali di mana ia ditahan di Markas Kodam IX selama tiga hari dan tiga malam.⁸¹⁵ Di Bali ia diserahkan kepada Kopassus yang menginterogasinya dan tidak membolehkannya tidur selama tiga hari tiga malam:

Metode pertama, ketika saya di Bali, mereka tidak memberi kesempatan saya untuk tidur. Siang saya mengantuk, mereka juga berteriak-teriak. Malam [saya] mengantuk, mereka juga teriak. Jam dua malam mereka bicara dengan saya. Saya masih ingat Yunus Yosfiah, karena saya mengenal dia tahun 1983, dia masih berpangkat mayor. Dia bilang begini, begitu. Dia pukul meja, saya juga pukul meja. Kami saling pukul meja.⁸¹⁶

Xanana Gusmão kemudian dikirim ke Jakarta ke Badan Intelijen Strategis (BAIS) di mana Hendropriyono mengunjunginya dan ia memberi pernyataan di Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).

Xanana Gusmão divonis penjara seumur hidup pada Mei 1993 dan dikirim ke penjara Cipinang di Jakarta untuk menjalani hukumannya. Pada Agustus 1993 Soeharto mengurangi hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Pada Agustus 1995 Xanana disekap di sel isolasi setelah ia berupaya mengirim surat yang tidak direstui dari penjara ke Konferensi PBB Keempat Mengenai Perempuan di Beijing untuk melindungi hak perempuan Timor yang menurutnya, “telah dilanggar secara sistematis” oleh Indonesia selama 20 tahun.⁸¹⁷ (Lihat Bab7.6: Pengadilan politik.)

593. Setelah penangkapan Xanana Gusmão, militer dan polisi menahan orang yang memiliki hubungan dengan Xanana. Pada Desember 1992, hanya dua minggu setelah penangkapan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB melaporkan ke Komisi Hak Asasi Manusia bahwa setidaknya 20 orang kerabat dekat dan keluarga Xanana Gusmão telah ditangkap dan ditahan.⁸¹⁸ Amnesty Internasional menduga bahwa mereka yang ditahan di Dili menjadi korban penganiayaan dan penyiksaan berat.⁸¹⁹ Pemilik rumah tempat Xanana ditangkap, Aliança Araújo, suaminya Augusto Pereira, dan anak-anak mereka dibawa ke markas SGI. Mereka disekap di sana selama tujuh bulan dan selama itu mereka disiksa dan dianiaya, misalnya beberapa kuku kaki Augusto dicabut menggunakan tang. Salah satu dari para perempuan yang ditahan belakangan bersaksi bahwa ia telah diperkosa.⁸²⁰

594. Menurut Asia Watch, sembilan anggota keluarga Xanana Gusmão ditangkap,⁸²¹ termasuk adik perempuan Xanana, Armandina Gusmão, suaminya, beserta dua anak mereka. Mereka ditangkap tidak lama setelah penangkapan Xanana oleh intelijen kepolisian “di depan kepala desa mereka dan tanpa diberi tahu alasannya, yang merupakan pelanggaran KUHAP dan juga pelanggaran atas standar-standar internasional”⁸²² Keluarga tersebut kemudian dibawa ke Polwil dan diinterogasi terus-menerus selama tiga hari. Armandina Gusmão mengatakan kepada Komisi bahwa polisi menunjukkan bukti-bukti kepada mereka. Polisi juga memotret dan mengambil sidik jari mereka. Setelah tiga hari di Polwil, Armandina dan suaminya ditutup matanya kemudian dibawa ke markas SGI dalam dua mobil terpisah. Mereka menghabiskan lima bulan di Markas SGI dan sesudah itu dibawa ke Nusra Bhakti selama seminggu.⁸²³

595. Setidaknya ada satu kasus yang dilaporkan kepada Komisi di mana seseorang yang pernah ditahan karena dianggap melakukan kontak dengan Xanana Gusmão ditangkap kembali setelah tertangkapnya Xanana. Di Ainaro, seorang laki-laki yang dianggap berhubungan dengan Xanana Gusmão dipanggil kembali setelah dibebaskan, ketika Xanana Gusmão ditangkap, dan diperintahkan melapor setiap

pagi selama sebulan. Sebaliknya ada juga orang yang dibebaskan dari penahanan setelah penangkapan Xanana karena mereka tidak lagi diperlukan untuk mewujudkan penangkapan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Afonso Maria:

Sebelum penangkapan Xanana Gusmão, mereka selalu memukul dan menyiksa kami. Yang selalu mereka tanyakan kepada saya adalah, “Apakah Anda memiliki jaringan dengan Xanana?” Kalau Anda menjawab tidak memiliki hubungan, maka Anda akan dipukul dan disetrum dengan aliran listrik, sampai Anda mengakui dan merekapun menghentikan siksaan itu. Setelah Xanana ditangkap pada 20 November, maka kami pun dibebaskan.”⁸²⁴

596. Yang lainnya dibebaskan dari wajib lapor dan kerja paksa, namun hanya setelah mereka melakukan sumpah setia kepada Indonesia. Vicente Tavares ditangkap bersama tujuh orang anggota klandestin dari Carau-Balu (Viqueque) pada Oktober 1992 oleh Batalion 407 karena mereka melakukan kontak dengan Xanana Gusmão. Mereka ditahan selama enam hari namun kemudian diwajibkan melapor ke pos militer di Ossu (Ossu, Viqueque). Setelah Xanana Gusmão ditangkap, mereka dibebaskan dari wajib lapor namun diharuskan mengambil sumpah (mungkin untuk setia kepada Indonesia) dan meminum darah anjing di depan Muspida, Tripika, dan Komandan Korem dari Dili.⁸²⁵

Kisah Olga Corte-Real

Olga Corte-Real mulai terlibat dalam gerakan klandestin pada 1982, di mana dia dan beberapa anggota keluarganya bertemu dengan anggota Falintil Birak dan Kasihan, serta membicarakan tentang kendala yang dihadapi Falintil. Seminggu kemudian, Olga, Petronela, dan Manuel Corte-Real bertemu dengan Komandan Falintil Mauhunu di *Aldeia* Trilolo, Holarua (Same, Manufahi) untuk merencanakan strategi klandestin.

Pada 1990, Olga bekerja sebagai perawat kesehatan di puskesmas di Desa Datina, Holarua (Same, Manufahi). Pada Agustus 1990, Olga bertemu Xanana Gusmão di Kampung Kakau-Lidun, Bairro Pite (Dom Aleixo, Dili). Olga memberikan kesaksian tentang pengalamannya kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Perempuan dan Konflik, 28-29 April 2003.

Mungkin ada mata-mata ABRI yang memberitahukan atau melapor mengenai kegiatan klandestin yang saya jalani. Pada tanggal 8 November 1992, saya, Graciana, Fernando Cardoso, dan Gabriel C Trindade da Costa ditangkap oleh seorang polisi pribumi yang bernama T500 dan beberapa orang ABRI dari Koramil Manufahi. Mereka membawa kami ke Kodim, di mana komandan Kodim

T501 dan Komandan Batalion 514 sedang menunggu kami. Saat itu T501 menanyakan kepada saya, apakah saya dan adik saya Regina membantu memberi obat-obatan kepada Xanana di Hoholau. Saya menjawab bahwa saya dan adik saya tidak membawa obat tersebut untuk diserahkan langsung ke Xanana, tetapi kami hanya kirim melalui seorang estafeta bernama António Martins. Pada kenyataannya, saya dan adik saya yang langsung memberikan obat tersebut, tetapi saya membohongi mereka.

Pada saat itu, T501 meminta agar kami memberitahu nama perempuan lain di dalam jaringan klandestin, tetapi saya katakan kepada dia bahwa para perempuan di dalam jaringan saya hanyalah sepupu saya Graciana, adik saya Regina, dan saya sendiri. Sebenarnya, ada beberapa perempuan lain [dalam jaringan] seperti Angelina da Costa, Fernanda de Jesus, Eleonora Cardoso, dan Francisca Cardoso. Saat itu juga T501 mengancam bahwa jika di kemudian hari dia temukan nama-nama perempuan lain maka dia akan memotong leher saya. Saya menjawab bahwa bersedia leher saya dipotong apabila informasi yang saya berikan tidak benar.

Pada saat interogasi sedang berlangsung, seorang Nanggala [Kopassus] masuk ruangan. Nanggala membawa saya ke rumah lain. Setibanya di sana saya diinterogasi lagi oleh seorang polisi intelijen yang bernama T490. Saya diinterogasi mulai dari jam 9 sampai pukul 3.30. Pada saat itu juga teman dari T490 yang bernama T502 masuk ke ruangan di mana saya diinterogasi. Dia mencaci-maki saya dan juga mengatakan bahwa saya sering bersetubuh dengan Xanana. T502 menyuruh Luis Cardoso dan adiknya António Martins untuk duduk di atas sebuah kursi secara bergantian untuk menindas jari kaki saya dengan kursi tersebut sampai kuku kaki saya berwarna hitam.

Besoknya tanggal 9 November 1992 sekitar jam 10, seorang komandan ABRI tiba dari Dili dengan sebuah helikopter yang mendarat di base camp. Pada saat itu beliau membawa sebuah tustel polaroid untuk memotret saya. Setelah itu beliau diangkut oleh helikopter tersebut dan langsung kembali ke Dili. Kami diantar pulang ke Datina oleh ABRI sekitar pukul 4.

Saya diwajibkan ikut apel dan lapor di Kodim mulai pada tanggal 1 Januari 1993 sampai bulan April 1994. Meskipun saya ikut apel setiap hari, namun kegiatan klandestin dan kerjasama dengan Falintil di hutan tetap berjalan lancar.⁸²⁶

Pembalasan atas serangan-serangan Resistansi

597. Pola penangkapan massal warga sipil menyusul serangan Falintil terhadap target-target militer atau pemerintahan, berlanjut selama periode ‘normalisasi dan konsolidasi’, walaupun dalam skala yang lebih kecil. Pihak penguasa merespons serangan-serangan seperti ini dengan melakukan penangkapan, penahanan sewenang-wenang, penganiayaan, dan penyiksaan atas tersangka yang biasanya adalah anggota pergerakan klandestin, namun juga terhadap warga sipil.

598. Antara 1985 dan 1987, Komisi mendengar tentang serangan-serangan terpisah oleh Falintil, terutama di Distrik Lautém namun juga di Manufahi, yang mengakibatkan dilakukannya pembalasan oleh pihak militer.⁸²⁷ Sekitar 1990-an polisi dan kelompok-kelompok paramiliter menjadi semakin terlibat dalam penumpasan serta penahanan dan penyiksaan terhadap tersangka. Contoh-contoh berikut adalah insiden-insiden utama Falintil pada 1990-an yang diketahui oleh Komisi. Kesaksian yang diterima Komisi dari korban penumpasan oleh anggota militer dan polisi menjelaskan bahwa respons yang umum adalah penangkapan, terkadang melibatkan penyiksaan dan perlakuan kejam dan tak berperikemanusiaan lainnya. Contohnya adalah:

- Baucau Kota pada Oktober 1992 setelah terjadi pembunuhan oleh pihak Falintil
- Ermera, 1996, setelah pembunuhan seorang warga sipil oleh Falintil
- Serangan terhadap Brimob di Dili dan Baucau, Mei 1997
- Serangan-serangan di Manufahi 1998

Baucau, Oktober 1992

599. Komisi menerima pernyataan tentang pembunuhan terhadap orang Indonesia asal Sulawesi oleh Falintil pada 5 Oktober 1992 di sebuah restoran di Kota Lama Baucau. Jerónimo Paulo Freitas menceritakan kepada Komisi tentang kejadian tersebut dan kemudian menjelaskan bahwa lima hari sesudah kejadian, anggota-anggota dari Batalion Infanteri (Yonif) 315 dan Tim Saka menangkapnya atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan tersebut. Jerónimo ketika itu aktif dalam jaringan klandestin di Baucau. Seorang anggota Tim Saka yang bernama T503, memukulnya pada bagian punggungnya dengan menggunakan senapan dan kemudian membawanya ke Kodim Baucau. Di sana, seorang anggota militer yang diidentifikasi sebagai T504 menginterogasi Jerónimo tentang insiden tersebut sementara anggota militer lainnya, T505, menyiksanya dengan cara memukulinya dengan balok kayu serta menghantam dan menendangnya. Jerónimo mengatakan kepada Komisi bahwa ia kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung berwarna hitam dan dibawa ke Desa Gariuai (Baucau Kota, Baucau), di mana ia dilemparkan ke dalam toilet dan ditinggal selama 13 hari dan hanya diberi kulit pisang dan garam untuk makan.⁸²⁸

Ermera, Oktober 1996

600. Komisi mengetahui tentang terbunuhnya seorang warga sipil asal Indonesia oleh Falintil empat tahun kemudian di Ermera pada Oktober 1996, yang juga diikuti dengan penangkapan-penangkapan warga sipil. Komisi menerima kesaksian bahwa seorang anggota Falintil membunuh seorang pedagang kain asal Indonesia di Ermera karena ia mencurigai orang tersebut bekerja untuk intelijen.⁸²⁹ Kali ini bukan militer melainkan polisi yang menggunakan insiden tersebut untuk menahan para pemuda aktivis prokemerdekaan dari beberapa desa di wilayah tersebut.

601. João Alves Trindade mengatakan kepada Komisi bahwa pada 16 Oktober, tujuh pemuda dari *aldeia* Lekesi (Railaco, Ermera) —João Alves Trindade, Eduardo dos Santos, Gaspar dos Santos, Silvestre Martins, João, Luis Salsinha, Joel Assunção Neves—ditangkap oleh opsir polisi pribumi bersenjata T506, T507, T508, T509, T510, dan polisi orang Indonesia T511, T512, dan T513. Polisi-polisi tersebut kemudian mengikat tangan para tahanan, kemudian menyeret mereka menuruni lereng gunung dan memukuli mereka dengan kayu. Kelompok tersebut kemudian mengalami penyiksaan dan penganiayaan lebih lanjut di kantor polisi Gleno (Ermera). João Alves Trindade mengatakan kepada Komisi:

Sampai di Polres Gleno, polisi menyuruh saya dan teman-teman melepaskan semua pakaian hingga telanjang, dimasukkan dalam sel lalu disetrum dengan listrik, pegang kami punya alat kelamin, tarik, pukul, tendang hingga kami punya badan bengkak semua, pukul kepala kami hingga pecah dan ancam, paksa kami membuat deklarasi yang seharusnya saya dan teman-teman tidak lakukan, tapi kami ikut apa yang mereka sudah berbuat. Kami ditahan di sel polisi selama dua bulan.⁸³⁰

602. João Alves Trindade dan teman-temannya ditahan di Polres Ermera selama dua bulan dan kemudian disidangkan. Mereka memulai masa hukuman penjara sepuluh tahun mereka di Penjara Becora, namun melarikan diri pada 11 September 1999 setelah Jajak Pendapat.⁸³¹

603. Seorang anggota polisi, T506, juga dilaporkan menahan Julito Babo di Darhetu Mate, Poniñala (Ermera, Ermera). T506 membawa Julito Babo ke Polres Gleno di mana ia ditelanjangi dan dompet, salib, serta pakaiannya diambil. Ia kemudian mengikat Julito Babo pada sebuah salib, sebagai sebuah parodi Yesus, dan memukulinya sampai larut malam. Ia kemudian menangkap seekor cicak dan memaksa Julito Babo untuk memakan cicak tersebut dan menyuruhnya untuk menjilat sisa makanan di lantai.⁸³²

604. Komisi juga mendapatkan pernyataan yang menengarai bahwa para anggota keluarga pemuda-pemuda klandestin juga menjadi korban penangkapan sewenang-wenang dan penganiayaan. Amalia Aleixo Martins mengatakan kepada Komisi bahwa setelah anak-anaknya—Eduardo dos Santos dan Gaspar dos Santos—ditahan, seorang anggota polisi, T512, datang dan menangkap dia dan suaminya Pedro Martins di

Poetete (Ermera, Ermera) pada 16 Oktober 1998. Mereka ditahan secara sewenang-wenang di Polres Ermera dan dianiaya untuk memaksa mereka memberikan bukti-bukti yang memberatkan anak mereka. Amalia Martins mengatakan bahwa T512 menginterogasinya sambil memukulinya, menjambak rambutnya, mengancam untuk menelanjinginya, dan mendorongnya ke pintu. Setelah empat hari mereka dibebaskan, namun mereka diwajibkan melapor setiap hari dan anggota polisi T506 memeras Rp900.000,00, dua kambing, enam ayam, seekor anjing, dan uang untuk membeli rokok setiap hari dari dirinya dan suaminya.⁸³³

Serangan-serangan seputar pemilihan umum Indonesia 1997

605. Pada 1997 terjadi beberapa serangan Falintil seputar waktu pemilihan umum Indonesia 29 Mei 1997.[†] Menurut Amnesty International, 42 orang termasuk polisi dan pejuang Falintil terbunuh dalam serangan-serangan tersebut.[‡] Dua serangan terbesar dilakukan terhadap unit polisi Brigade Mobil (Brimob):

- Serangan pertama dilakukan oleh kelompok pemuda prokemerdekaan di Dili pada 28 Mei 1997. Sekitar pukul 22.00, 15 pemuda menyerang sebuah pos penjagaan Brimob di Bairro Pite, sebuah kompleks perumahan di Dili.[‡] Mereka melukai lima orang anggota polisi dan salah seorang dari pemuda tersebut mencuri sepucuk senapan, walau kemudian membuangnya ke selokan.⁸³⁴ Lima dari penyerang tersebut tertembak dan mati dalam serangan itu.
- Serangan kedua dilakukan oleh Falintil pada 31 Mei di Kecamatan Quelicai (Baucau). Falintil menyerang truk Hino yang ditumpangi oleh 26 anggota polisi Brimob dan dua tentara yang sedang mengantar sebuah kotak suara untuk penghitungan di Baucau. Mereka melempar granat yang meledakkan sebuah drum bensin. Akibat ledakan itu, 13 orang yang menumpang truk tersebut mati terbakar. Falintil kemudian menembak empat orang lainnya yang berusaha melarikan diri.⁸³⁵ Francisco da Costa, yang terlibat dalam penyerangan, menggambarkan insiden itu:

Pada sore harinya kotak suara tersebut akan diantar kembali oleh polisi untuk dihitung di Baucau. Sehingga para polisi juga menuruti aturan itu, mereka membawa kembali kotak suara itu

.....
* Menurut HRW, serangan lain terkait pemilu Indonesia terjadi di Seisal pada 29 Mei, di mana tempat pemungutan suara diserang oleh kelompok tak dikenal. Seorang petugas Pemilu, Abinau Salay yang adalah anggota Wanra ditebas dengan parang dan terluka. 10 orang ditangkap. (Human Rights Watch, Deteriorating Human Rights in East Timor [Arsip CAVR, HRW East Timor\reports\1997\indtimor\index.html].) Menurut João Bosco, penyerangan terkait pemilu di Daraqua (Laga, Baucau) terjadi pada 27 Mei 1997. (CAVR, Wawancara dengan João Bosco, Quelicai, Baucau, 2 September 2004.)

† Menurut Wakil Kapolda Timor Timur Kolonel Pol. Drs. Jusuf Mucharam selama Mei 1997, 17 warga sipil dibunuh oleh Falintil (di Lospalos sepuluh orang, Baucau dan Liqieqa masing-masing dua orang, di Viqueque, Ermera dan Ainaro masing-masing satu orang) (AI UA 391/97)

‡ Menurut Romeo da Conceição, (Pernyataan HRVD 5074) para pemuda bertindak di bawah perintah Kaixa Koto Morok; menurut Reinaldo Marchal, mereka bertindak di bawah perintah Xanana Gusmão dan Taur Matan Ruak; dan menurut Mariano Soares, mereka bertindak di bawah perintah Taur Matan Ruak dan Komandan Region II, Sabica.

dengan beberapa mobil polisi yang dijaga sangat ketat oleh aparat keamanan. Tetapi setelah para polisi sampai di tengah jalan, sekitar suco Abafala dan Quelicai, para Falintil menghadang para polisi yang membawa kotak suara dengan menyerbu para polisi sehingga mengakibatkan banyak anggota polisi yang meninggal pada waktu itu.⁸³⁶

606. Wakil Kepala Polisi Daerah Timor Timur, Kolonel Polisi Jusuf Mucharam, melaporkan bahwa sekitar 120 anggota Resistansi ditangkap oleh pihak penguasa sehubungan dengan serangan tersebut dan serangan-serangan lain di berbagai daerah di Timor-Leste.⁷

Penangkapan-penangkapan setelah serangan di Dili

607. Kesepuluh pemuda yang masih hidup setelah penyerangan di Dili dapat melarikan diri dari lokasi kejadian namun setidaknya sembilan orang dari mereka (sembilan nama berhasil diidentifikasi kepada Komisi) kemudian berhasil ditangkap atau menyerahkan diri. Mereka adalah Francisco da Silva, Reinaldo Marcal, Adalio Barreto, Domingos Barros, Abeto Soares, Frederico Soares, João da Cunha, Egidio da Cunha, Francisco da Conceição, Romeo da Conceição, dan Mariano Soares. David Dias Ximenes, yang dianggap pihak penguasa sebagai otak di balik penyerangan itu, juga ditangkap pada 31 Mei di rumahnya.⁸³⁷ Istrinya juga tak lama kemudian ditahan.⁸³⁸ Penduduk sipil lainnya yang tidak terlibat dalam penyerangan itu pun kemudian ditangkap dan tidak hanya di sekitar Dili. Francisco Garcia Correia dan seorang laki-laki bernama João ditangkap di Manatuto.⁸³⁹

608. Semua tahanan yang diketahui Komisi (kecuali João dari Manatuto yang ditahan di Manatuto) dibawa ke Polda. Di sana mereka diinterogasi dan disiksa serta dianiaya.⁸⁴⁰ Francisco Carcea Correia mengatakan kepada Komisi bahwa ia dipukuli dan ditendangi oleh lima orang polisi, serta dimasukkan ke dalam karung yang kemudian digantung.⁸⁴¹ Romeo da Conceição, salah satu dari mereka yang menyerahkan diri ke Polda pada 31 Mei 1997, mengatakan kepada Komisi :

Kami dicaci-maki, lalu kami disuruh melucuti pakaian, kemaluan saya dipukul, disetrum dengan listrik oleh Polisi M283. Pada saat makan, kami disuruh dansa dulu baru kemudian makan. Selama enam bulan kami ditahan dan disiksa. Pada bulan Januari 1998, kami dipindahkan ke LP Becora, di sana kami disiksa oleh penjaga LP.⁸⁴²

609. Bagi kesembilan pelaku penyerangan tersebut, proses interogasi dilaksanakan oleh polisi dari Polda dan anggota intelijen. Sebagai contoh, Mariano da Costa Sarmiento Soares, telah diinterogasi oleh anggota polisi T515, Letnan T516, dan seorang petugas intelijen bernama T517.⁸⁴³ Karena dugaan menjadi otak di belakang

* "Pelaku penyerangan terhadap Kompi A Brimob di Desa Bairro Pite, Kecamatan Dili Barat, Rabu (28/5) yang telah tertangkap 26 orang" apakabar@clar.net 9 Juni 1997)

penyerangan tersebut, David Ximenes diinterogasi oleh sebuah tim militer dari Jakarta, termasuk Komandan Militer Timor Timur, Mayor Jenderal T518. Tidak lama setelah David Ximenes ditangkap, Brimob juga menangkap istri dan anaknya dan membawa mereka ke Polda.

610. Menurut Reinaldo Marchal, setelah diinterogasi polisi, mereka dibawa ke Markas besar SGI untuk diinterogasi oleh anggota Kopassus. Para anggota Kopassus menghantamnya dengan senapan dan meremukkan jari kakinya dengan kaki bangku sambil menanyakan mereka tentang siapa yang bertanggung jawab atas penyerangan itu. Mereka menjawab bahwa hanya merekalah yang berada di belakang penyerangan tersebut:

Mereka bilang, "Kami tidak percaya. Pasti ada orang yang menyuruh yang kami tidak tahu." Lalu mereka tetap melakukan penyiksaan. Dan mereka mengatakan, "Kalian harus bicara terus terang, kalau tidak ini malam kalian kami bawa ke Tacitolu."⁸⁴⁴

611. Para anggota Kopassus membawa mereka ke Tacitolu, di mana mereka diancam, sebelum mengembalikan mereka ke Polda. Di sana mereka diinterogasi lagi sambil ditendang, dipukuli dengan pentungan kayu, dan diancam akan dibunuh karena mereka pengkhianat. Interogasi, penganiayaan, dan penyiksaan berlanjut selama seminggu sampai akhirnya mereka dipaksa menandatangani sepucuk surat yang ditulis oleh para penahan mereka. Mereka menandatangani surat tersebut karena merasa terancam oleh penjaga bersenjata.⁸⁴⁵

612. Para tahanan kemudian dikirim ke Penjara Becora, di mana mereka melewati sebulan di dalam sel gelap. Di Penjara Becora, mereka terus dianiaya oleh sipir-sipir Becora dan juga oleh seorang warga Indonesia bernama T519. Mereka dipaksa melucuti pakaian mereka hingga hanya mengenakan celana dalam, lalu diperintahkan berdiri kemudian dipukuli, ditendang, dan diberi sengatan listrik.⁸⁴⁶

613. Kesembilan tersangka pelaku kemudian disidangkan dan dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara. Mereka dipenjarakan di Becora. David Ximenes dibebaskan tanpa sidang setelah beberapa hari.⁸⁴⁷

Penangkapan-penangkapan setelah penyerangan di Quelicai (Baucau)

614. Penyerangan di Quelicai pada Mei 1997 juga memicu operasi penumpasan oleh pihak militer yang melibatkan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan tersangka pelaku dan otak di belakang penyerangan tersebut, demikian juga anggota-anggota klandestin yang diketahui dan warga sipil biasa dari kecamatan Quelicai dan Vemasse di Baucau. Operasi tersebut kemudian berlanjut dengan penangkapan

* Penangkapan-penangkapan sehubungan dengan penyerangan ini juga terjadi di Dili: David Dias Ximenes dan istrinya, João Angelo; juga di Ainaro: Francisco Magno, José Acacio, dan istrinya. [Amnesty International, Urgent Action 391/97.]

(dan pembunuhan) komandan senior Falintil, David Alex, pada 25 Juni 1997. Ia dicurigai oleh militer sebagai otak di balik penyerangan tersebut, bersama enam orang lainnya.* †

615. Dalam sebagian besar penangkapan yang dilaporkan kepada Komisi, militer bekerjasama dengan Tim Saka, terkadang disertai oleh anggota Tim Rajawali, Brimob, atau Hansip. Apabila penangkapan dilakukan terhadap tersangka pelaku penyerangan, hal ini dilakukan oleh sebuah kelompok besar dari berbagai institusi. Tahanan kemudian akan dibawa ke Koramil Quelicai, Polda Dili, atau Markas Polisi Resor Baucau,‡ dan banyak juga yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya untuk diinterogasi.⁸⁴⁸ Sebagian besar interogasi para tahanan tersebut dilakukan oleh Komandan Koramil atau komandan-komandan Tim Saka seperti T520 dan T521, dibarengi dengan penganiayaan dan penyiksaan oleh anggota Tim Saka atau polisi.

616. Jumlah pasti orang yang ditangkap sehubungan dengan penyerangan tersebut tidaklah jelas, walau demikian diketahui 19 orang kemudian didakwa dan satu orang meninggal. Banyak penangkapan juga dilakukan terhadap warga sipil biasa dari desa-desa di Kecamatan Quelicai yang tidak terlibat dalam penyerangan tersebut dan hanya ditahan dalam jangka waktu yang pendek untuk diinterogasi.⁸⁴⁹ Sebagai contoh, Constâncio Gaio mengatakan kepada Komisi bahwa ia hanyalah seorang petani dan penggembala ternak, namun ia ditahan ketika para anggota ABRI datang dari Baucau untuk mengambil jenazah anggota Brimob yang terbunuh dalam serangan tersebut. Ia dibawa ke Polres Baucau di mana ia dipukuli, ditendang, serta ditodong dengan senapan, kemudian diinterogasi tentang kejadian tersebut. Ia dibebaskan setelah tiga hari.⁸⁵⁰

617. Orang-orang yang diduga terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyerangan tersebut ditahan untuk waktu yang lebih lama.⁸⁵¹ Anggota klandestin Luis Maria da Silva (Maukiak) ditahan sehubungan dengan penyerangan tersebut bersama beberapa orang lainnya pada 5 Juni 1997 oleh anggota Brimob, polisi, Tim Sera, Tim Rajawali, Tim Saka, Komandan T521, dan wakilnya, T523. Salah satu yang terlibat dalam penyerangan tersebut, Francisco da Costa, ditahan pada 6 Juni 1997.⁸⁵² João Bosco ditangkap di gereja saat akan meninggalkan misa pada 8 Juni 1997 oleh Koramil dan anggota Tim Saka.⁸⁵³

.....
* Pernyataan HRVD 7681; Human Rights Watch, *Deteriorating Human Rights Situation in East Timor*, Arsip CAVR Archives di HRW East Timor\reports\1997\indtimor\index.html. Menurut Amnesty International, yang ditahan bersamanya antara lain José António Belo, Césario da Costa, Gil da Costa, Guilherme dos Santos. (AI Index: ASA 21/54/97.)

† Sebagai tanggapan atas kematian David Alex, Falintil juga menahan beberapa orang yang dicurigai bekerjasama dengan militer sehingga mengakibatkan ia ditahan. "Pada 24 Agustus 1997, pukul 16.00, tiga anggota Falintil pergi ke Mamutu di Desa Samalari (Baucau, Baucau) dan menahan anak Joana Martins yang bernama Justino Sarmiento karena ia dituduh terlibat dalam penangkapan David Alex di Desa Bahu, Baucau oleh ABRI. Setelah mereka menangkapnya, tiga orang Falintil mengikat kedua tangan Justino Sarmiento dan menyuruhnya berlutut. Mereka mulai menginterogasinya dengan pertanyaan seperti "Kamu tahu soal penangkapan David Alex di Uaidei?" (Pernyataan HRVD 7721)

‡ Menurut HRW, mereka yang ditahan pada 5 Juni dibawa ke Kodim. [*Human Rights Watch, Deteriorating Human Rights Situation in East Timor*, Arsip CAVR di HRW East Timor\reports\1997\index.html.]

618. Ketiganya kemudian dibawa pertama-tama ke Koramil Quelicai di mana mereka dipukuli dan disiksa oleh komandan-komandan Tim Saka termasuk T521. João Bosco juga dipukuli oleh tentara-tentara Koramil tersebut dan juga oleh T524, seorang opsir intelijen. Francisco da Costa menceritakan bagaimana ia disiksa oleh anggota Tim Saka selama dua hari:

Mereka mengambil sebuah kayu untuk pasang di kedua kakiku. Aku dipukul, ditendang. Tulangku-tulangku menjadi patah, kedua pipiku tidak bisa digerakkan karena aku sudah babak-belur dan tak berdaya. Aku sudah berdarah tapi terus dipukul hingga gigiku berjatuh. Selama dua hari disiksa.⁸⁵⁴

619. Dari Koramil, para tahanan kemudian dipindahkan ke Polres Baucau. Luis Maria da Silva hanya berada di sana selama dua jam dan dipukuli oleh anggota polisi, sebelum dipindahkan ke Rumah Merah selama enam hari, di mana anggota militer memukulinya. Francisco da Costa dan João Bosco melewati beberapa hari di Polres dan João Bosco menggambarkan bagaimana ia disiksa di sana oleh kapten dari Polres tersebut, T525. Pada 11 Juni 1997 ketiganya, bersama dengan Marcus Ximenes, Mário Filipe, dan Januario Martins, dipindahkan ke Polda Dili di mana mereka ditahan dan diinterogasi selama beberapa bulan.* Mário Filipe menggambarkan proses interogasi rutin di Polda Dili:

Metode interogasinya adalah satu orang bertanya sedangkan empat orang lainnya melakukan penyiksaan. Saat satu orang menginterogasi, yang lain menendang dari belakang, samping kiri-kanan, depan sehingga kita tidak bisa berbicara dengan tenang. Saya hanya diberi makan satu kali dalam sehari. Saya dikunjungi oleh Palang Merah. Satu hari sebelum kunjungan Palang Merah, semua ruangan dibersihkan dan juga saya diberi makan tiga kali dalam sehari. Tapi setelah kunjungan Palang Merah kami diperlakukan seperti semula, artinya membiarkan kami tidur di ruangan yang kotor, tidur di lantai, kadang tidak diberi makan.⁸⁵⁵

620. Kondisi di Polda benar-benar tidak manusiawi, mungkin karena para polisi ingin membalas dendam atas kematian teman-temannya. Para korban menggambarkan perlakuan yang mereka terima:

Mereka tumpahkan nasi bungkus di atas lantai dan menyuruh [tahanan] untuk menjilat sampai habis.⁸⁵⁶

Ada yang makanannya dicampur dengan pecahan kaca lalu mereka [dipaksa] untuk makan. Mereka juga disuruh bersihkan lantai bukan dengan kain tetapi dengan badan, rol sana rol sini sampai bersih.⁸⁵⁷

* Francisco da Costa mengatakan bahwa ini berlangsung lebih daripada sebulan, Luis da Silva ditahan selama dua bulan, dan João Bosco mengatakan kepada Komisi bahwa semuanya ditahan selama tiga bulan.

621. Setelah melewati waktu mereka di Polda, para anggota klandestin Baucau kemudian dikirim kembali ke Polres Baucau di mana mereka ditahan sambil menunggu sidang. Francisco da Costa ditahan selama enam bulan di tahanan polisi di Baucau.⁸⁵⁸

622. Pada akhirnya 19 orang tersebut disidangkan di Baucau dan Komisi mendengar bahwa satu orang, Januario Martins, meninggal dalam tahanan.^{*} Dari mereka yang selamat, 16 orang menerima hukuman antara sembilan sampai 15 tahun; José Maria dan Francisco da Costa mendapat hukuman mati. 16 orang tersebut dibawa ke Kalisosok di Surabaya (Jawa Timur, Indonesia) setelah mereka menerima hukuman mereka. Francisco da Costa dan Luis da Silva menolak hukuman mereka dan karena itu tetap berada di Baucau sampai 1999.⁸⁵⁹

623. Sekilas pengalaman penahanan dan penyiksaan Luis Maria da Silva menunjukkan pola yang sudah dikenal yakni memindah-mindahkan tahanan antara tempat-tempat penahanan yang berbeda, hubungan dekat antara militer, polisi, dan milisi lokal dalam penahanan, interogasi, penganiayaan, dan penyiksaan tahanan serta penggunaan siksaan selama interogasi yang hampir berlangsung secara rutin.⁸⁶⁰

Tabel 13: Pembunuhan dan penghilangan di Quelicai, 1978-1979

| Penahanan | Lamanya | Penyiksaan/penganiayaan | Pelaku |
|--------------------|----------------------------|--|------------------------|
| Koramil Quelicai | 1 hari | "Pukul, hantam, dan tendang saya hingga badan saya babak belur dan saya pingsan" | Komandan Tim Saka T521 |
| Polres Baucau | 2 jam | Dipukul dan dihantam. | Polisi |
| Rumah Merah Baucau | 6 hari | "Mereka memukuli, menendang dan menginjak-injak saya lagi hingga mulut, hidung dan telinga saya berdarah. Saya jatuh pingsan. Setelah sadar, mereka tetap menghajar saya." | Militer |
| Polda Dili | 2 bulan | "Sebelum saya masuk ke dalam ruang tahanan, tangan dan tubuh saya diikat dengan tali, saya dipukul, tubuh saya ditarik dan dilempar ke dalam WC bersama dengan enam." | Polisi |
| Polres Baucau | 1 bulan | "Saya dipukul, dihantam, dan disekap hingga babak belur; tubuh saya disiram dengan air panas.... Anggota polisi memberikan nasi yang telah dicampur dengan potongan jarum dan pecahan beling." | Polisi |
| Penjara Baucau | Menjalani hukuman penjara. | | |

* Menurut João Bosco: "Januario Martins sampai di Polda Dili mereka pukul hingga mati. Lalu saya tidak tahu dibawa ke mana. Kejadian itu terjadi tanggal 11 Juni 1997." [CAVR, Wawancara dengan João Bosco, Quelicai, 2 September 2004].

624. Selain dari mereka yang ditahan di Baucau, Komisi juga mendengar tentang penangkapan seorang anggota senior klandestin di Dili. Vasco da Gama (Mauleki), seorang pemimpin klandestin, ditahan pada Juni 1997 karena dicurigai telah memerintahkan penyerangan Quelicai dan melakukan aktivitas klandestin lainnya. Rajawali, Kopassus, polisi, dan anggota Koramil di bawah perintah kapten T527 dari Kupang dan wakilnya, T528, melaksanakan penangkapan tersebut. Mereka menutup mata Vasco da Gama dengan kain hitam, mengikat tangannya di belakang punggung dan memukulinya selama perjalanan dari rumahnya ke Polda. Mereka juga menanyainya tentang serangan terhadap Brimob dan tentang siapa yang memerintahkan memboikot pemilu. Vasco da Gama (Mauleki) mengatakan kepada Komisi:

Saya tidak mengaku, maka setelah tiba di depan pintu Polda, saya diguling dan didorong ke dalam drum yang berisi air. Dalam kondisi babak-belur, aku disekap dalam sel untuk diinterogasi. 15 menit kemudian, aku dipukul, ditendang, tanganku diborgol ke belakang, kakiku diikat dengan kursi oleh orang yang tidak saya kenal karena mata saya ditutup dengan kain hitam.⁸⁶¹

625. Keesokan harinya ia menjalani pemeriksaan lebih jauh oleh Sersan Mayor Polisi T529 dari Kupang dan Letnan Kolonel T530, yang ingin mendapatkan informasi mengenai pemimpin klandestin lainnya, baik yang berada di hutan maupun di Dili. Vasco da Gama dituduh telah memberikan Rp9 juta kepada gerakan klandestin untuk mendanai sebuah demonstrasi. Ketika Vasco tidak mengakuinya, T529 mulai menghantamnya dengan sebuah tongkat besi dan popor senapan, serta menendangnya. Ia memasukkan laras pistol ke mulut Vasco dan mengancam akan menembak apabila ia tidak menyebutkan nama. Empat hari kemudian Kolonel T531 menginterogasi Vasco lagi tentang nama-nama anggota klandestin.⁸⁶²

Polisi

Seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus di atas, polisi mulai mengambil peran yang lebih aktif dalam penangkapan dan penahanan para tersangka politik pada 1990-an. Hal ini terjadi di tingkat lokal maupun nasional.

Salah satu alasan untuk ini adalah ‘normalisasi’ provinsi Timor Timur yang berarti sebagian wilayah ini tidak lagi dianggap daerah perang dan dengan demikian polisi memiliki tanggung jawab keamanan yang lebih besar. Bahkan sejak 1983, ketika para tahanan politik mulai diadili oleh polisi, mereka dan berkas-berkas mereka dilimpahkan untuk diproses melalui sistem peradilan (lihat Bab 7.6: Pengadilan politik).

Perlakuan polisi terhadap tahanan

Penahanan oleh polisi tidak lalu berarti perlakuan yang lebih baik. Surat perintah penangkapan jarang digunakan dan tahanan dibiarkan *incomunicado* selama sehari-hari atau berminggu-minggu dan sering tidak mendapat akses ke pengacara sebelum sidang pengadilannya dimulai. Polisi juga diidentifikasi sebagai pelaku dalam banyak kasus penganiayaan dan penyiksaan yang dilaporkan kepada Komisi. Mereka juga disebut dalam kasus-kasus di mana tahanan disekap dalam kondisi yang mengenaskan tanpa makan dan minum.

Polisi dan militer

Dalam banyak kasus, khususnya sampai awal 1990-an, polisi dan militer bekerjasama dalam melakukan penangkapan dan mendapatkan informasi. Sampai 1998, angkatan kepolisian secara resmi masih menjadi bagian dari militer dalam sistem Indonesia dan secara umum mengandaikan status kepatuhan dalam sistem itu. Pemeliharaan hukum dan aturan dan penjagaan kedaulatan hukum sering hanya menjadi tambahan bagi pencapaian tujuan-tujuan militer dalam konteks konflik (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

Pernyataan Constâncio da Costa dos Santos (Akita) kepada Komisi menggambarkan meningkatnya peran penting yang dimainkan oleh polisi. Ia menceritakan kepada Komisi mengenai penangkapannya karena membawa bom ke Dili dari Indonesia. Bom tersebut dimaksudkan untuk meledakkan pos polisi pada September 1997. Pihak penguasa di Timor-Leste telah diberi tahu mengenai kedatangannya dan ketika kapalnya sampai di Pelabuhan Dili, polisi dan komandan SGI serta komandan Kopassus Mayor Jenderal Prabowo Subiyanto, Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Tono Suratman, dan Danrem Kolonel Sidabutar sudah menunggunya.*⁸⁶³

Constâncio ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Polres. Akan tetapi, interogasinya dijalankan oleh komandan SGI. Ia diinterogasi dari pukul 10.00 sampai pukul 02.00 keesokan paginya, umumnya mengenai seberapa jauh kerjasama antara Brigade Negra Falintil dan kelompok-kelompok teroris internasional. Karena ia menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, ia dipukuli, disudut dengan rokok, diborgol dari belakang, dan disuruh memegang buku telepon yang berat. Menurut Constâncio, polisi di Polres tidak ambil bagian dalam penganiayaan ini.

.....
* Sementara dalam perjalanan dari Semarang naik kapal, sebuah bom lagi meledak tanpa sengaja di rumah anggota klandestin di Demak, Semarang (Jawa Tengah, Indonesia). Akibatnya, lima orang ditangkap, ditahan, dan diadili di Semarang. Sementara itu, polisi dan militer di Timor diberi tahu bahwa Constâncio sedang dalam perjalanan di kapal ke Dili dan mereka menanti kedatangannya di pelabuhan.

Keesokan harinya Zacky Anwar Makarim, Kepala Intelijen ABRI, datang dari Jakarta untuk menemui Constâncio. Constâncio menggambarkan kepada Komisi bagaimana saat para anggota SGI ingin membawanya untuk menemui Zacky Anwar, seorang Kapten polisi tidak setuju mengeluarkannya dari penguasaan polisi. Ia kemudian setuju asalkan beberapa anggota polisi menyertai anggota SGI ke rumah panglima, tempat Zacky menginap.

Constâncio dibawa dari Polres ke rumah panglima untuk makan malam. Constâncio berbicara panjang lebar dengan sang panglima dan ia mengingat:

Saya agak terkejut juga karena pada saat dia berbicara tentang semua gerakan di Jawa kelihatannya Zacky seperti orang Timor-Leste dan tahu semua liku-liku, pokoknya pergerakan di Jawa sampai jaringan masuk ke Dili, terus tentang organisasi-organisasi perlawanan, organisasi mahasiswa, maupun organisasi-organisasi lacinya yang waktu itu muncul di Jawa...

Setelah “interogasinya” ia dikembalikan ke Polres, di mana ia ditahan selama dua bulan.

Ketika para anggota SGI meminta kapten di Polres agar mereka boleh membawanya keluar di malam hari untuk ditanyai, permintaan para anggota SGI ini ditolak. Seorang mayor polisi mengatakan kepada Constâncio bahwa ia mungkin saja akan “dihilangkan” jika SGI yang menangkapnya dan bukan polisi.

Liquiçá, Juli 1997

626. Komisi menerima pernyataan tentang penangkapan-penangkapan setelah pembunuhan oleh Falintil terhadap tiga anggota pasukan Rajawali di Desa Darulete (Liquiçá, Liquiçá) pada pertengahan Juli 1997. Masyarakat Maumeta (Bazartete, Liquiçá) menceritakan bagaimana anggota Kodim Liquiçá dan SGI datang dan menangkap warga sipil yang mereka curigai terlibat dalam penyerangan tersebut.⁸⁶⁴ Mereka yang ditahan kemudian dibawa ke Polres Liquiçá,⁸⁶⁵ Koramil Liquiçá,⁸⁶⁶ dan kemudian ke Kodim.⁸⁶⁷ Jacinto da Costa, salah satu tahanan, menggambarkan penangkapan, interogasi, dan penyiksaan terhadap dirinya:

Pada tanggal 31 Juli 1997, hari Kamis pukul 2 sore, rumah saya didatangi oleh ABRI kurang-lebih 20 orang dipimpin langsung oleh T532 dan T533. Saya ditanya oleh T533 mengenai KTP lalu saya tunjukkan padanya. Saya disuruh naik mobil Hino; di dalam mobil tersebut sudah ada delapan orang teman-teman: Francisco, Marcelino, Adelino Vidigal, Silvino dos Santos, António de Jesus, Guilherme, Armindo, dan António Vidigal. Kami dibawa ke kantor

desa Darulete-Liquica. Setelah kami turun dari mobil Hino, T534 langsung merobek kaos saya. Setelah itu saya dan teman-teman disuruh lagi naik mobil Hino dibawa ke Kodim 1638 Liquiçá. Di sana saya dan teman-teman diperiksa oleh SGI kurang-lebih 10 orang dan kemudian saya dipisahkan dari teman-teman. Saya dibawa ke Koramil. Sampai di sana saya dimasukkan dalam sebuah ruangan. Tentara T534 memaksa saya agar menanggalkan semua pakaian dan hanya memakai celana dalam. Tidak lama kemudian kurang lebih 10 sampai 15 orang anggota SGI datang memukul saya dengan senjata, menampar, meninju, dan memukul saya dengan bambu di kepala hingga darah keluar dari kepala. Saya diinterogasi tentang keberadaan Falintil namun saya bilang saya tidak tahu, lalu saya disiksa. Wajah saya diiris dengan silet, pukul, tendang, tampar, dan tinju secara terus-menerus selama tiga hari.⁸⁶⁸

627. Setelah interogasi dan penyiksaan mereka, Jacinto da Costa dan Silvino dos Santos dibawa kembali ke kantor desa Darulete oleh empat anggota SGI dan Rajawali. Mereka ditahan di sana selama dua hari tanpa makan, namun kemudian mereka diperbolehkan pulang. Namun keesokan harinya anggota Rajawali datang dan membawa kedua orang tersebut ke Kodim Liquiçá dan kemudian ke Koramil Liquiçá, di mana lagi-lagi anggota-anggota militer memerintahkan mereka melucuti pakaian hingga tinggal mengenakan celana dalam dan tentara-tentara tersebut memukul, menendang, menampar, dan menghantam mereka. Jacinto da Costa mengatakan kepada Komisi bahwa seorang anggota ABRI, T535, menendangnya hingga pingsan. Ketika ia sadar satu jam kemudian, wajahnya diiris menggunakan silet dan ditusuk-tusuk dengan paku. Setelah beberapa hari keduanya dipindahkan lagi ke Polres Liquiçá, di mana mereka ditahan selama empat bulan dan 18 hari. Akhirnya, mereka dipindahkan ke Penjara Becora di mana rambut Jacinto dicukur hingga botak dan ia diinterogasi. Ia terus berada di Penjara Becora selama tujuh bulan.⁸⁶⁹

Dua insiden Falintil di Alas (Manufahi), akhir 1998

628. Pada Oktober dan November 1998, dua serangan terhadap militer Indonesia di Manufahi mengundang reaksi militer yang keras dan sejumlah besar kasus penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap warga sipil. Sebagian besar kekerasan yang terjadi dilakukan oleh milisi Ablai dengan dukungan militer, menyerupai kekerasan yang terjadi kemudian pada 1999.

Serangan pertama

629. Serangan pertama adalah pembunuhan spontan atas tiga orang pada pertemuan antara masyarakat di Weberek, Desa Dotik (Alas, Manufahi) dan Falintil di bawah Komandan T536 pada 28 Oktober 1998. Menurut Alexandro da Costa, dua anggota Kopassus datang dengan mobil dan ketika mereka memaksa lewat, Falintil mengambil senjata mereka. Mateus da Costa Amaral mengatakan kepada Komisi

bahwa empat anggota Kopassus ditangkap oleh para pemuda prokemerdekaan di pertemuan tersebut. Tiga dari tahanan tersebut dibunuh; seorang dari mereka berhasil melarikan diri dan melaporkan insiden tersebut ke Dili.⁸⁷⁰

630. Pada petang hari setelah penyerangan tersebut, sebuah kekuatan gabungan dari militer, Brimob, Binpolda, dan T537, seorang anggota Koramil, menyerang Weberek. Komisi diberitahu bahwa 16 individu ditahan dalam serangan ini, namun Komisi hanya menerima nama lima orang saja yang ditahan: Mateus da Costa Amaral, Alexandre, João Maia, Patricio da Costa, dan Alexandro da Costa.* Sangat mungkin, dua orang perempuan muda, Vicentina Fernandes dan Etelvina Fernandes Dias, juga ditahan. Mateus da Costa mengatakan bahwa ia dan tiga orang lainnya dilemparkan ke atas truk Hino dan dipukuli sebelum dibawa ke Polres Same. Mereka dilemparkan ke dalam kandang ayam sebelum dibawa keluar untuk diinterogasi. Mateus da Costa mengatakan kepada Komisi:

Anggota Brimob masuk lalu menindih meja pada kaki kami baru kemudian satu orang diinterogasi dan empat orang pukul dengan senjata, telanjangi kami baru suruh kami menggosokkan tubuh di dinding, kami disuruh berlutut, ditendang. Lalu anggota tentara T538...masuk bertanya, "Kamu kenal saya atau tidak?" sampai tiga kali, saya menjawab, "Tidak!" Langsung dia mengeluarkan pisau potong telinga saya. Karena telinga saya belum putus, dia tarik hingga putus; dia tusuk lagi dada saya hingga luka, masukkan pistol dalam mulut saya, telanjangi, tendang, pukul...hingga saya jatuh ke tanah. Dia istirahat tidak lama kemudian dia ambil lagi ekor ikan pari, gosok di tengkuk saya, berlutut telanjang, suruh cium tahi orang dan jilat tahi di WC. Setelah itu seorang anggota polisi orang Bali datang bawa makanan dan air panas dan berikan bajunya pada saya lalu bilang, "Kamu berdoa saja dalam hati."

Saya dibawa oleh Nanggala dan Milsas[†] dengan Hartop, mata saya diikat dibawa ke Ponte Bolmeta Same, diturunkan tiga kali untuk dibunuh namun tiba-tiba komandan memanggil melalui radio/HT bilang jangan dibunuh maka saya dibawa kembali ke Kota Same dan luka-luka saya diobati, jam 4 pagi bawa saya ke Polsek Same lalu diberikan pakaian.⁸⁷¹

631. Alexandro da Costa mengatakan bahwa ia ditahan keesokan harinya, pada 29 Oktober, ketika ia pergi ke Dotik untuk mengantarkan beberapa barang milik gereja. Anggota ABRI di Dotik mengejar dan menembaknya, namun meleset. Ketika mereka berhasil mengejanya, dia ditangkap dan dipukuli dengan popor senapan, ditendang, dan dihantam sampai terjatuh ke tanah dan mengeluarkan

* Korban-korban lainnya juga disebut dalam pernyataan-pernyataan mengenai penyerangan atas Koramil Alas, 12 hari setelahnya.

† 'Milsas' adalah singkatan 'militerisasi'. Milsas adalah para mantan Hansip yang, setelah tiga bulan dilatih di Bali dan Jawa, menjadi anggota militer (lihat Bagian 4: Rezim Pendudukan).

darah. Ia kemudian dilempar ke dalam sebuah lubang, disiram air mendidih, dijambak rambutnya, dan diseret, kemudian kulitnya dibakar. Tentara kemudian membawanya untuk digabungkan dengan tahanan lainnya di Polres Same.⁸⁷²

632. Pada 20 November 1998, beberapa tahanan dibebaskan dan enam lainnya dibawa ke Polda Dili dan ditahan selama sembilan bulan sampai Juli 1999.⁸⁷³

Serangan kedua

633. Serangan kedua terjadi dua minggu kemudian, pada 9 November 1998, dan dilakukan oleh Falintil dan warga lokal.* Menurut Human Rights Watch, serangan tersebut direncanakan untuk menangkap Siswanto, opsir yang berhasil melarikan diri dari Weberek. Kelompok tersebut menyerang Koramil Alas dan membunuh tiga prajurit Indonesia, merampas 36 senapan dan membawa setidaknya 13 tentara (kebanyakan orang Timor) bersama mereka ke gunung selama dua malam sebelum akhirnya mereka dibebaskan.† Serangan terhadap Koramil Alas, seperti serangan 16 tahun sebelumnya terhadap Koramil di Hatu-Builico (Ainaro), mendapatkan balasan berat dari pihak militer, yang melibatkan penangkapan sewenang-wenang besar-besaran, penganiayaan, dan penyiksaan.⁸⁷⁴

634. Para pelaku dari Falintil kemudian ditangkap oleh Batalion Marinir 301 dan Yonif 744 serta Yonif 745 seminggu setelah serangan tersebut dan dibawa ke Kodim Manufahi.⁸⁷⁵ Pihak militer terus mencari pelaku lain dan keberadaan senjata yang dicuri. Mereka mulai menangkap warga sipil di Alas, demikian juga mereka yang dicurigai terlibat dalam kedua serangan tersebut atau dalam gerakan klandestin (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, tentang pembunuhan warga sipil dalam operasi penumpasan ini).

635. Seperti pengalaman masyarakat pada awal 1980-an, banyak warga Alas yang lari karena takut atas respons dari ABRI. Yang lainnya diperintahkan pergi ke Gereja Alas oleh kepala desa Alas dan pemimpin-pemimpin setempat lainnya.⁸⁷⁶ Walaupun demikian, komunitas tersebut tidak mendapatkan perlindungan di gereja. Komandan Koramil Alas, seorang prajurit Timor bernama T539, pergi ke gereja tersebut setelah serangan dan mulai menginterogasi orang-orang tentang keberadaan senjata-senjata yang dirampas. Anggota ABRI yang menyertainya memukuli beberapa orang.⁸⁷⁷

* Menurut Pernyataan HRVD 1531, Falintil berada di bawah pimpinan Komandan T545, T546, T547. Human Rights Watch juga mengatakan bahwa ini adalah kelompok bersenjata yang terdiri atas 50 sampai 80 orang, termasuk beberapa anggota Falintil, tapi sebagian besar di antaranya adalah penduduk desa dari sekitar Desa Taitudak (Alas, Manufahi). (<http://hrw.org/press98/nov/etimor1123.htm>).

† Para prajurit yang dilaporkan diculik adalah Luis Fasalo, Henriques Morato, José Pereira, Manuel Oliveira, José Conceição, António da Costa, Felisberto, Mateus Conceição, José Fernandes, Thomas Martins, dan Francisco O.P. Seak (Pernyataan HRVD 9019), dan João Baptista dan Manuel dos Santos yang ditahan untuk waktu yang lebih lama. (<http://hrw.org/press98/nov/etimor1123.htm>; Pernyataan HRVD 1566 dan 9019).

636. Pada 14 November komandan milisi Ablai di Alas, bersama T540,⁸⁷⁸ T541,⁸⁷⁸ T542,⁸⁷⁹ T543⁸⁸⁰ dan Camat Alas T544, datang ke gereja tersebut. Mereka mengizinkan beberapa orang pergi namun membawa beberapa orang lainnya ke gedung Sekolah Dasar Alas. Di sana anggota Yonif 744 dan T434, Kepala Intelijen dari Kodim Manufahi 1634, lagi-lagi berusaha mencari tahu tentang senjata-senjata tersebut dengan memaksa orang menunjukkan persembunyian senjata itu.⁸⁸¹ Mereka mengancam menembak mati atau mengubur hidup-hidup siapa saja yang tidak memberikan informasi sampai dengan pukul 16.00.⁸⁸² Kepala Desa T541 (menurut laporan adalah seorang komandan Ablai), bersama anggota-anggota Ablai T550 dan T551, secara verbal dan fisik menganiaya para tahanan, menghina mereka, dan menarik-narik alat kelamin mereka.⁸⁸³ Para warga sipil tersebut ditahan secara sewenang-wenang di gedung SD itu selama sebulan dalam kondisi yang buruk; makanan jarang diberikan dan gereja dan keluarga tidak diizinkan mengunjungi para tahanan.⁸⁸⁴

637. Komisi mendengar bahwa pada 17 November T541 memindahkan sekelompok tahanan ke dalam sebuah rumah kosong.⁸⁸⁵ Di sana komandan Koramil T539 dan kepala seksi intelijen, T434, terus menyiksa dan menginterogasi para tahanan. Flaminia da Costa, seorang anggota klandestin berumur 20 tahun yang juga dibawa ke rumah tersebut, mengatakan kepada Komisi bahwa mereka diinterogasi tentang peran mereka dalam gerakan klandestin dan ia ditampar keras 10 kali sampai mulutnya berdarah:

Mereka memberitahukan kepada kami, "Apabila ada anggota tentara di Same ini ada yang hilang, maka kalianlah menjadi sasaran penangkapan. Biar kalian lari ke sektor Timur pun kami tetap mengikuti dan menangkap kalian."⁸⁸⁶

638. Mereka kemudian dibawa ke Koramil Alas dan ditahan selama sebulan di mana T539 terus menginterogasi mereka dan T434 menyiksa mereka di sini.⁸⁸⁷

639. Selain dari mereka yang mengungsi ke gereja, banyak warga sipil lainnya juga ditahan secara sewenang-wenang, diinterogasi, dan dianiaya. Korban pelanggaran-pelanggaran ini melaporkan bahwa ada berbagai macam pelaku yang terlibat, termasuk:

- Anggota Koramil seperti komandan Koramil T539, T552, dan T553 serta kepala seksi intelijen T434⁸⁸⁸
- Anggota milisi Ablai termasuk T554, T555 dan T556⁸⁸⁹
- Yonif 744⁸⁹⁰
- Polisi termasuk seorang Indonesia bernama T557 dan seorang Timor bernama T558.⁸⁹¹
- Kepala desa (juga disebut-sebut sebagai komandan milisi Ablai) T541 dan T540⁸⁹²
- Milsas T559,⁸⁹³ T560,⁸⁹⁴ dan T561.⁸⁹⁵

.....
* Menurut Pernyataan HRVD 1510, seorang Babinsa; menurut Pernyataan HRVD 1568, seorang komandan Ablai—orang yang sama bisa saja mempunyai dua posisi.

640. Para tahanan pernah dibawa ke gedung sekolah dasar, Koramil Alas, Pos Nanggala Alas, Polres, markas milisi Ablai, dan rumah-rumah pribadi, termasuk rumah kepala desa Taitudak, T562.⁸⁹⁶ Sebagian besar tahanan ditahan dan diinterogasi untuk beberapa hari, namun ada juga yang ditahan selama berminggu-minggu. Kebanyakan dari mereka dipukuli, dihantam, dan diancam dengan senapan dan pisau. Sebagian dari mereka diperintahkan oleh Yonif 744 untuk mencari senjata-senjata yang hilang.⁸⁹⁷

641. Dalam salah satu kasus, seorang laki-laki Timor mengatakan kepada Komisi bahwa ia ditangkap pada 13 November 1998 bersama delapan orang temannya. Mereka tidak mengetahui apa-apa tentang insiden Falintil di Alas namun mereka tetap ditangkap oleh kepala desa yang sekaligus merupakan Komandan Ablai T540 dan anggota milisi Ablai T556 di Taitudak. Mereka dibawa ke rumah T562 di Desa Taitudak, di mana mereka dipukuli dan disiksa. Keesokan harinya mereka dibawa ke Bercoban, Taitudak (Alas, Manufahi), tempat para prajurit dari Yonif 744 dan Yonif 745 memukuli mereka, lalu mereka dikembalikan ke Alas di mana mereka terus dipukuli. Mereka kemudian ditahan di rumah anggota milisi Ablai T554 selama enam hari dan selama enam hari itu mereka melakukan kerja paksa.⁸⁹⁸

642. José Tilman juga menceritakan kepada Komisi tentang penahanan lima orang guru perempuan dari SMP Alas, yang juga adalah anggota klandestin. Mereka ditahan selama dua malam di Polres lama karena mereka diduga membantu Falintil.⁸⁹⁹ Mereka ditahan oleh anggota milisi Ablai dan militer.⁸⁹⁹

Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh penguasa pendudukan Indonesia pada 1999

643. Bagian ini membahas sifat dan luasnya penahanan sewenang-wenang, penganiayaan, dan penyiksaan yang terjadi pada 1999. Tahun 1999 dibahas secara terpisah dalam Laporan ini karena sejumlah situasi unik yang melatarbelakangi terjadinya penahanan: Proses Jajak Pendapat yang memecah-belah komunitas; teknik-teknik kampanye yang bersifat memaksa dan keji yang digunakan, termasuk upaya menindas gerakan prokemerdekaan, dibentuk dan dipersenjatanya kelompok-kelompok milisi sebagai pelaksana teknik-teknik ini; perekrutan massal, sering dengan paksaan ke dalam kelompok-kelompok milisi; kehadiran para staf Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak Juni untuk mengawasi Jajak Pendapat tersebut; dan akhirnya kekerasan dan kehancuran luarbiasa yang terjadi pasca-Jajak Pendapat tersebut. Keengganan pihak berwenang untuk mencegah atau menghukum mereka yang melakukan tindak kekerasan seperti yang tertulis di beberapa bagian terdahulu bab ini dan bab lain dalam Laporan ini, adalah hal yang biasa. Yang tidak biasa pada

* Mereka adalah Joana Alves, Antonina Alves, Artunisa Fernandes, Anunciación, dan Filomena.

1999 adalah bahwa tindakan semacam itu terjadi dengan dilatari suatu proses di bawah pengawasan internasional dan di bawah suatu perjanjian internasional yang mengikat Indonesia untuk memastikan bahwa Jajak Pendapat berlangsung dalam keadaan aman.

644. Penangkapan, penahanan, dan penyiksaan sewenang-wenang yang terjadi sejak akhir 1970-an mencapai puncaknya pada 1999. Namun, pola-pola penahanan sewenang-wenang, penganiayaan, dan penyiksaan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dalam hal tujuan, bentuk, sasaran, dan pelakunya. Pola-pola ini akan dibahas secara terperinci berikut ini.

645. Bibit penyebab kekerasan dan kehancuran yang luarbiasa mulai ditabur sejak akhir 1998 (lihat 3.18: Jajak Pendapat). Pada waktu itulah rencana pembentukan dan perluasan milisi pertama kali mulai disusun dan para pelaku kekerasan 1999 mulai membuat kehadirannya terasa pada akhir 1998. Penahanan sewenang-wenang, penganiayaan, dan penyiksaan mulai meningkat waktu itu, contohnya adalah penangkapan besar-besaran di Alas (Manufahi).

646. Subbab berikut ini membahas sejumlah pola besar penahanan dan penyiksaan pada 1999, secara kuantitatif dan kualitatif, termasuk cara-cara para tahanan ditawan dan alasan-alasan penahanan mereka. Subbab ini kemudian membahas mengenai pola penahanan dan penyiksaan dalam fase-fase berikut:

- November 1998-Maret 1999, ketika rencana Jajak Pendapat disusun dan diumumkan dan milisi dibentuk
- April 1999, ketika milisi mulai merekrut para pemuda dan melaksanakan berbagai operasi di seluruh wilayah
- Mei 1999, setelah polisi Indonesia diberi tanggung jawab keamanan (Kesepakatan 5 Mei)
- Juni - Agustus 1999, selama kehadiran UNAMET dan persiapan Jajak Pendapat
- September - Oktober 1999, setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat

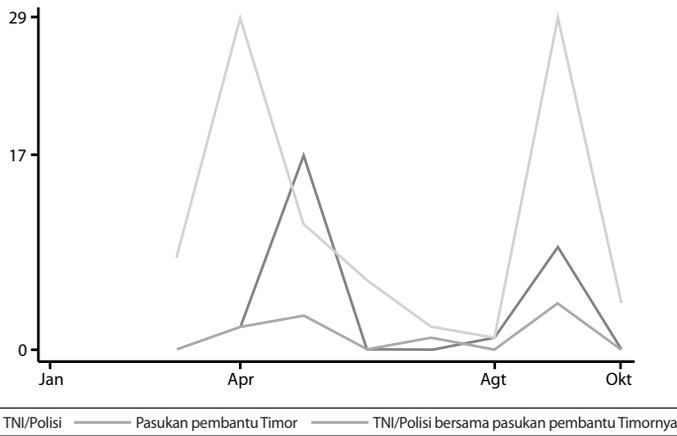
Profil statistik penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan pada 1999

647. Pola-pola penahanan dan penyiksaan lintas ruang dan waktu pada 1999 hampir sama dengan berbagai pelanggaran lain yang terjadi pada tahun yang sama, seperti pembunuhan di luar hukum dan kekerasan-kekerasan seksual.

Pola-pola lintas waktu untuk penahanan dan penyiksaan

648. Grafik berikut menunjukkan pola penahanan dan penyiksaan per bulan pada 1999.

Bagan tindakan penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pembantu Timornya, 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

649. Hampir semua penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan dilaporkan terjadi pada April, Mei, dan September 1999, sebagaimana tampak dalam grafik di atas. Namun jumlah pelanggaran mulai meningkat pada Januari dan Februari. Setelah tibanya UNAMET, jumlah kejadian yang dilaporkan relatif rendah, tetapi mulai meningkat lagi pada Agustus menjelang Jajak Pendapat.

650. Kejadian-kejadian penyiksaan dan penahanan berhubungan erat sepanjang tahun tersebut dan pada bulan-bulan tertentu (Juli dan Oktober) benar-benar sama. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi tahanan yang mengalami penyiksaan sangat tinggi.

Pola-pola lintas ruang

651. Selama fase akhir konflik pada 1999, 75,1% (9.494/12.634) kekerasan non-fatal yang dilaporkan muncul di wilayah barat. Data yang diperoleh Komisi sesuai dengan klaim bahwa komunitas yang dekat ke perbatasan Timor Barat dan di Oecussi pada 1999 mengalami kekerasan pada tingkatan yang lebih tinggi karena milisi pro-otonomi dan militer Indonesia menarik diri ke Timor Barat.

Tabel 14: Jumlah kasus penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan pada 1999 yang dicatat oleh Komisi

| Kabupaten | Penahanan | Penyiksaan | Penganiayaan |
|-----------|-----------|------------|--------------|
| Lautém | 32 | 23 | 19 |
| Viqueque | 114 | 105 | 22 |
| Baucau | 20 | 10 | 10 |
| Manatuto | 51 | 33 | 20 |
| Manufahi | 79 | 72 | 94 |

| | | | |
|----------|-----|-----|-----|
| Aileu | 104 | 67 | 64 |
| Ermera | 249 | 264 | 266 |
| Liquiçá | 257 | 211 | 182 |
| Dili | 195 | 119 | 92 |
| Ainaro | 90 | 74 | 53 |
| Covalima | 569 | 377 | 367 |
| Oecussi | 419 | 417 | 488 |
| Bobonaro | 497 | 412 | 283 |

Lama penahanan

652. Pada 1999 panjangnya waktu penahanan jauh lebih singkat dibanding periode-periode sebelumnya. Terkadang penahanan berlangsung hanya beberapa jam saja, tapi selama itu para tahanan mengalami penyiksaan, pemukulan, atau bentuk penganiayaan lainnya, juga termasuk menerima berbagai ancaman untuk membuat mereka mendukung opsi otonomi. Penahanan-penahanan ini sering dimaksudkan untuk mengintimidasi para pendukung prokemerdekaan, bukan untuk menahan mereka dalam waktu lama, dan tempat-tempat yang digunakan untuk menahan para tahanan adalah pusat-pusat penahanan dadakan yang tidak dirancang untuk menampung banyak tahanan dalam jangka waktu panjang.

Kelompok-kelompok sasaran pada 1999

653. Penelitian kualitatif dan kuantitatif Komisi mengindikasikan secara tegas bahwa para pelaku dalam sebagian besar kejadian penahanan sewenang-wenang secara spesifik mengincar anggota kelompok-kelompok prokemerdekaan seperti CNRT, kelompok-kelompok pelajar dan mahasiswa, jaringan klandestin, dan Falintil. Orang-orang lain yang tidak jelas kaitannya dengan gerakan prokemerdekaan namun menunjukkan penentangan terhadap opsi otonomi juga menjadi sasaran pelanggaran hak-hak asasi manusia. Di antara mereka ada pegawai negeri sipil, staf UNAMET, dan anggota partai-partai politik lokal. Anggota keluarga orang-orang yang berkampanye untuk kemerdekaan juga mengalami pelecehan dan terkadang ditahan.

654. Satu bukti penargetan orang-orang tertentu, selain kesaksian dalam berbagai pernyataan, adalah bahwa tahanan yang ditahan perorangan jumlahnya hampir dua kali lipat dibanding yang ditahan berkelompok pada 1999. Ini menunjukkan bahwa para individu yang ditahan sudah diincar untuk ditahan dan bukan ditangkap secara acak dalam suatu penangkapan massal.

Anggota CNRT

655. Victor da Cruz membuat sebuah daftar nama pendukung prokemerdekaan di Subdistrik Balibó (Bobonaro) untuk dikirim ke kantor CNRT di Dili. Ketika para anggota kelompok milisi Firmi Merah Putih mengetahui tentang hal ini, ia dipanggil ke pos Firmi di Balibó di mana ia dipukuli oleh para anggota Firmi, salah satunya orang Timor T565. Ia ditahan di sana selama dua minggu dan baru diperbolehkan pergi setelah ikut dalam upacara pengambilan sumpah di mana ia berjanji untuk bergabung dengan milisi Firmi bersama 15 orang lainnya.⁹⁰⁰ Di Railaco (Ermera) Daniel Ataidi disuruh melakukan 100 kali *push-up* oleh seorang Babinsa Indonesia, T566, karena ia ada dalam jajaran kepemimpinan CNRT. Setelah itu ia dibawa ke sebuah pos di mana ia disiksa oleh T566 dan dua anggota TNI Timor T567 dan T568.⁹⁰¹ Laporan-laporan lain mengenai penangkapan dan penganiayaan melibatkan korban yang mengenakan kaos CNRT dan menghadiri sebuah upacara pembukaan kantor CNRT, istri seorang anggota CNRT, dan banyak anggota CNRT lainnya.⁹⁰²

Anggota klandestin

656. Meskipun penguasa Indonesia menjadikan sasaran orang-orang yang tengah menantikan Jajak Pendapat, masih ada orang-orang yang ditangkap dan ditahan karena berhubungan dengan Falintil. Komisi telah menerima 567 pernyataan yang melaporkan penahanan terhadap orang-orang yang diidentifikasi sebagai anggota klandestin pada 1999. Bulan-bulan terjadinya penangkapan semacam itu adalah April dan Mei dan kemudian terjadi lagi dalam jumlah yang sedikit lebih kecil pada September dan Oktober.

Aktivistis pelajar dan mahasiswa

657. Para anggota Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur (DSMPTT) sudah secara terbuka melakukan kampanye kemerdekaan sejak akhir 1998 dengan berkeliling dari desa ke desa menjelaskan keuntungan dari kemerdekaan. Justino Ferreira Vicente mengatakan kepada Komisi bahwa ia ditangkap di Fatumean (Covalima) dan ditahan bersama 26 orang lainnya pada 23 April 1999. Ini terjadi dalam suatu serangan oleh Koramil Suai terhadap DSMPTT yang baru saja mengunjungi Fatumean untuk berkampanye bagi kemerdekaan. Setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat para anggota DSMPTT masih diincar bahkan hingga di Timor Barat, di mana sejumlah anggota mengunjungi. Agnes Lese mengatakan kepada Komisi bahwa suaminya, Edmundus Bere, ditangkap oleh para anggota milisi Laksaur pada 15 Oktober 1999 di Lakmaras, Atambua (Timor Barat), dan dibawa ke pos milisi karena ia seorang anggota DSMPTT. Ia disiksa di Lakmaras dan pada 17 Oktober dibunuh.⁹⁰³

* Pernyataan HRVD 6277. HRVD 8489 menggambarkan bagaimana dua mobil dari Koramil Kota di Suai mendarangi pos DSMPTT setempat dan menembak serta melukai dua orang mahasiswa.

Staf UNAMET

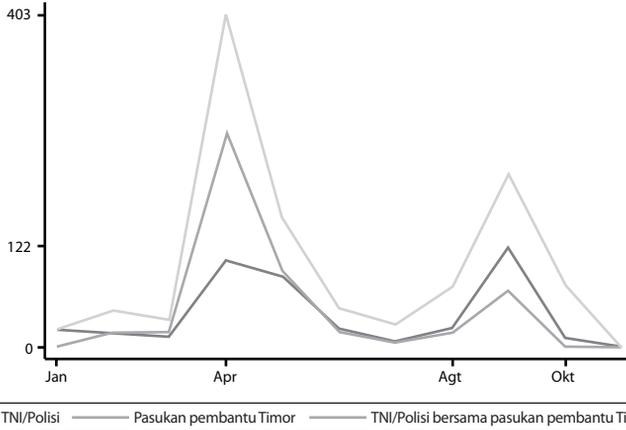
658. Komisi menerima setidaknya lima pernyataan yang melaporkan kasus-kasus di mana staf lokal UNAMET yang bekerja untuk Jajak Pendapat dan mereka yang dicurigai memiliki hubungan dengan UNAMET mengalami ancaman, gangguan, dan pemukulan.⁹⁰⁴ Kasus-kasus seperti ini semakin gencar terjadi menjelang Jajak Pendapat. Sebagai contoh, João da Costa menceritakan bahwa ia ditahan di kantor polisi Hato-Udo (Ainaro, Ainaro) beberapa hari menjelang Jajak Pendapat bersama tiga perempuan pegawai UNAMET.

659. Setelah hasil Jajak Pendapat diumumkan, sejumlah orang yang memiliki hubungan dengan UNAMET dihukum. Cristina dos Reis Ataide mengatakan kepada Komisi bahwa pada 9 September 1999 di Aissirimou (Aileu Kota, Aileu) rumahnya dibakar habis dan ia dipanggil ke Kodim Aileu dan dicaci-maki karena dicurigai memiliki hubungan dengan UNAMET.⁹⁰⁵ Armando do Rêgo ditahan pada 15 September di Desa Deudet (Lolotoe, Bobonaro) setelah gabungan TNI dan milisi KMMP (Kaer-Metin Merah Putih) melakukan sebuah operasi di desa tersebut. Ia diinterogasi mengenai UNAMET.⁹⁰⁶

Pelaku-pelaku

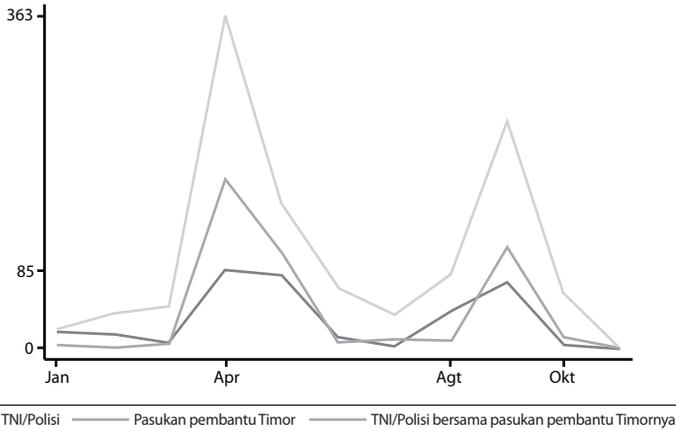
660. Pernyataan yang diberikan kepada Komisi menggambarkan sejumlah perubahan yang berbeda mengenai tanggung jawab pelaku untuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan pada 1999. Dari tindakan-tindakan penahanan sewenang-wenang yang didokumentasikan oleh Komisi, hampir semuanya dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, oleh kelompok-kelompok seperti milisi dan institusi pertahanan sipil, pegawai negeri yang bekerja sendiri, atau kadang militer dan kelompok ini bekerjasama. Kebanyakan penahanan dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi atau kelompok pertahanan sipil ini. Dari tindakan penahanan sewenang-wenang yang didokumentasikan Komisi pada 1999, 75,7% (2.104/2.779) dilakukan oleh kelompok milisi atau kelompok pertahanan sipil yang bekerja sendiri atau dalam kerjasama dengan polisi dan militer. Sementara itu 19,2% (534/2.779) dari aksi-aksi dilakukan sendiri oleh militer Indonesia. Proporsi yang sama, yaitu 82,5% (16.135/19.559) dari kasus-kasus penganiayaan dan penyiksaan terdokumentasi dilakukan oleh kekuatan pendudukan Indonesia dan kelompok-kelompok pendukung mereka. Juga, 75,8% (3.278/4.324) tindakan penganiayaan sewenang-wenang dan penyiksaan dilakukan oleh milisi, pegawai negeri, atau anggota organisasi pertahanan sipil (baik bertindak sendiri atau bekerjasama dengan militer dan polisi Indonesia).

Bagan tindakan penyiksaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pembantu Timornya, 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

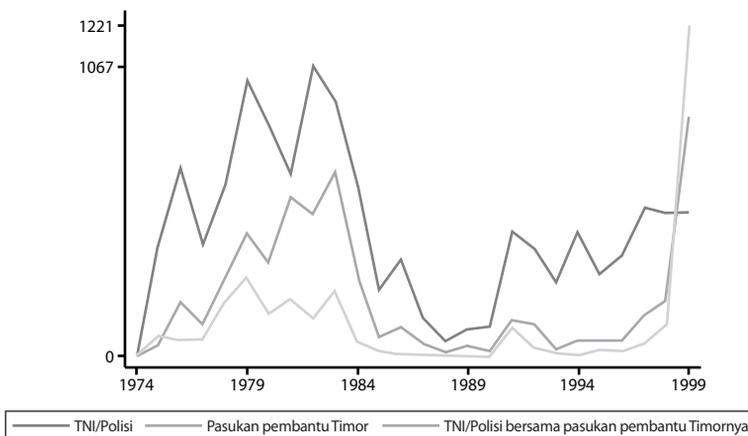
Bagan tindakan penganiayaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pembantu Timornya, 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

661. Pola-pola statistik ini menunjukkan rencana pendahuluan dan koordinasi pelaksanaan antara kedua kekuatan dalam penahanan sewenang-wenang. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini, tindakan penahanan sewenang-wenang yang sempat terdata, baik yang hanya dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia, oleh kelompok-kelompok pendukungnya, atau oleh kedua kekuatan itu, jelas berhubungan dari waktu ke waktu termasuk dalam selama 1999. Namun pada 1999, peran kelompok-kelompok ini makin kelihatan. Dari sini jelas bahwa militer Indonesia bukannya mencoba mengontrol kelompok-kelompok pendukung mereka, (terutama milisi-milisi pro-otonomi) malahan membiayai dan menganjurkan penahanan sewenang-wenang yang meluas menjelang dan setelah Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

Bagan tindakan penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pembantu Timornya, 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

662. Di dalam kategori 'Kolaborator Timor dengan militer Indonesia', juga tercakup organisasi-organisasi pertahanan sipil seperti Wanra (Perlawanan Rakyat) dan para anggota dari 25 kelompok milisi yang diketahui beroperasi di Timor-Leste. Ini juga mencakup anggota pemerintahan sipil, mulai dari bupati sampai kepala desa yang banyak di antaranya bekerja untuk tujuan pro-otonomi pada 1999, baik secara sukarela atau dipaksa oleh instansinya (lihat Sub-Bagian 4.3: Pemerintahan Sipil). Komisi menemukan bahwa para kolaborator ini dibentuk, dipersenjatai, dan sering diperintah secara langsung untuk melakukan berbagai kekerasan oleh militer Indonesia.

Lokasi penahanan

663. Penelitian kualitatif Komisi menunjukkan bahwa Koramil, kantor polisi, dan pos TNI digunakan secara luas pada 1999 seperti pada periode-periode lainnya, tetapi terjadi juga pengulangan pola-pola penahanan seperti pada 1970-an dengan

menahan orang di tempat-tempat penahanan darurat seperti pos-pos milisi yang baru dibangun, rumah pribadi, dan gedung umum seperti bangunan sekolah dasar.[†] Bentuk pusat-pusat penahanan ini memengaruhi pengalaman para tahanan. Karena gedung-gedung tersebut sering kecil dan tidak dirancang untuk menampung orang, para tahanan digabung dalam kelompok-kelompok kecil atau perorangan untuk waktu yang singkat dan kemudian dibebaskan. Kondisi penahanan sangat buruk dan banyak orang hanya diberi sedikit sekali makanan atau tidak samasekali, dan sejumlah tahanan berhasil melarikan diri karena penjagaan yang lemah. Komisi hanya menerima satu pernyataan yang menunjukkan bahwa seorang tahanan ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) resmi seperti LP Becora, Comarca Balide, LP Baucau, LP Gleno, atau LP Maliana pada 1999.[†]

Alasan penahanan dan penyiksaan

664. Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi dan berbagai wawancara yang dilakukan oleh staf Komisi dan yang lain mengungkapkan beberapa motif yang jelas dalam penahanan sewenang-wenang serta penyiksaan dan penganiayaan para korban. Sebelum Jajak Pendapat, alasan utama penahanan dan penyiksaan yang disebut adalah untuk memaksa korban dan penduduk pada umumnya agar menolak opsi kemerdekaan dan memilih untuk menjadi provinsi otonom Indonesia. Sebagai bagian dari strategi ini, para personel keamanan Indonesia dan kakitangan milisinya menangkapi individu secara acak atau pada pertemuan “sosialisasi” dan menginterogasi mereka tentang afiliasi politik mereka.

665. Ketika itu juga, para anggota milisi mulai menggunakan kekuasaan baru mereka terhadap penduduk melalui tindak-tanduk kekerasan secara acak. Kelompok-kelompok milisi umumnya terdiri atas orang-orang yang sudah lama terlibat dalam paramiliter Indonesia, kelompok-kelompok pertahanan sipil, dan para pemuda yang merasa terpinggirkan dan bermasalah. Beberapa orang hanya memanfaatkan kesempatan dan, dalam masa tidak adanya hukum dan ketegangan serta kekerasan yang semakin meningkat, diberi kuasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka mau tanpa dikenakan sanksi. Dan memang buktinya jelas bahwa militer tidak hanya mengizinkan tetapi juga secara aktif mendorong kebrutalan pihak milisi.

666. Berbagai alasan lain mencakup:

Perekrutan milisi secara paksa

667. Selain penahanan dan penyiksaan untuk mengintimidasi penduduk, alasan bagi penangkapan yang sering dilaporkan adalah untuk merekrut anggota baru untuk kelompok-kelompok milisi.⁹⁰⁷ Ketika dalam tahanan para korban dipaksa bergabung dalam berbagai kelompok milisi, kadang setelah ikut dalam ritual sumpah

* Tropical pertama kali digunakan oleh TNI pada 1970-an untuk menahan orang dan terkenal karena praktik penyiksaannya. Milisi Aitarak dan PPI di bawah komando pemimpinya, Eurico Guterres, kembali menggunakannya sebagai tempat penahanan pada 1999.

† Satu pernyataan dari seseorang yang ditahan di LP Ermera

darah atau upacara tradisional lainnya' di mana mereka bersumpah setia kepada Indonesia dan opsi otonomi, sebelum dilepas.⁹⁰⁸ Di Oecussi, Komisi menemukan adanya orang-orang yang diberi uang agar bergabung dengan milisi.⁹⁰⁹

668. Agostinho ditahan oleh milisi Mahidi di markas Mahidi di Zumalai (Covalima) karena kegiatan klandestin yang dilakukannya. Ia dipaksa bersumpah dengan meminum air rendaman bendera Indonesia. Ia kemudian diberi seragam pro-otonomi dan menjadi anggota Mahidi.⁹¹⁰ Masyarakat Desa Saboria (Aileu Kota, Aileu) menceritakan bahwa banyak pemuda dipaksa untuk bergabung dengan milisi AHI (Aileu Hametin Integrasi, Aileu Memperkuat Integrasi) pada saat pertemuan sosialisasi otonomi di desa tersebut yang diadakan oleh TNI, polisi, dan para pemimpin milisi. Para pemuda dipaksa mengikuti pertemuan desa untuk mempromosikan integrasi dan ikut dalam ritual sumpah darah.⁹¹¹ TNI menangkap João Leki, seorang pemuda penduduk Saboria, dan membawanya ke kantor AHI, di mana ia ditahan selama 24 jam dan dipukuli hingga tak sadarkan diri, untuk memaksanya bergabung dengan milisi tersebut.⁹¹²

Penerapan kuasa kekuatan pro-otonomi atas masyarakat

669. Komisi menerima laporan mengenai penangkapan, penyiksaan, dan penahanan dengan tujuan yang tampaknya adalah untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kini para pendukung pro-otonomi, khususnya kelompok-kelompok milisi, berkuasa atas penduduk sipil. Banyak dari penangkapan ini terjadi segera setelah suatu perekrutan massal, suatu upacara pelantikan anggota, atau acara publik lainnya, di mana para anggota milisi dihasut untuk mememorakporandakan komunitas tersebut. Kejadian yang paling dikenal adalah pertemuan semua kelompok milisi pada hari pengukuhan kelompok payung milisi, PPI, di Dili pada 17 April 1999, yang sesudahnya milisi membakar dan menjarah rumah-rumah di Dili, termasuk rumah Manuel Carrascalão.⁹¹³

Pembalasan terhadap serangan kelompok Resistansi

670. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada 1999 ada orang-orang yang ditangkap setelah serangan oleh kelompok Resistansi atau kejadian lain yang melibatkan kekuatan oposisi untuk menemukan pelakunya, tetapi juga untuk menghukum komunitas desa tempat terjadinya peristiwa tersebut. Kejadian-kejadian semacam itu terjadi misalnya di Distrik Ermera pada April 1999 dan dibahas lebih jauh di bawah ini (paragraf 696 – 730).

.....
* Tradisi Timor meminum darah kambing, anjing, dan juga manusia telah ada sejak lama dalam berbagai upacara adat. Belakangan digunakan oleh kelompok pro-otonomi sebagai cara untuk melancarkan kampanyenya. Komisi menerima banyak pernyataan mengenai penggunaan upacara sumpah darah untuk memaksa penduduk bersumpah setia untuk integrasi, telah digunakan sejak 1992. (Suwadi Atma (Kolonel Infantri) et al [eds.], *Kolakops Timor Timur Dalam Gambar dan Peristiwa Tahun 1992-1993*, Dili, 30 April 1993; lihat juga Pernyataan HRVD 7161;5610; 5592.)

Hukuman terhadap orang-orang yang terang-terangan mendukung kemerdekaan

671. Kekerasan digunakan untuk menghukum mereka yang secara terang-terangan menyatakan dukungan mereka untuk gerakan kemerdekaan. Banyak orang dipukuli, dianiaya, atau disiksa sebelum mereka dibebaskan setelah menerima berbagai ancaman serius terhadap diri dan keluarga mereka. Orang-orang yang diidentifikasi pada saat pawai mendukung kemerdekaan di jalan-jalan kemudian ditangkap dan diinterogasi.⁹¹⁴ Ada sejumlah laporan mengenai para pendukung kemerdekaan yang daun telinganya dipotong, seperti untuk menandai mereka.⁹¹⁵

672. Pendukung prokemerdekaan yang lain diminta membuktikan perubahan dukungan mereka dengan menandatangani suatu surat pernyataan yang menyatakan komitmen mereka terhadap otonomi serta memutus hubungan apapun dengan gerakan prokemerdekaan.⁹¹⁶ Surat pernyataan Alexandre dos Reis kepada Kodim Covalima pada 26 Mei tertulis seperti ini:

*Ketika saya keluar, saya tidak boleh lari ke hutan. Kalau saya lari, maka keluarga saya di Zumalai, di Galitas, dan Akar Laran akan dibunuh di muka umum. Saya harus dukung otonomi.*⁹¹⁷

673. Motif semacam ini menjadi semakin kuat setelah hasil Jajak Pendapat diumumkan pada 4 September 1999. Mereka yang diketahui sebagai pendukung kemerdekaan dikumpulkan kemudian disiksa dan banyak juga yang dibunuh.

Memperoleh informasi intelijen tentang para pemimpin dan struktur prokemerdekaan

674. Pada 1999, TNI dan milisi melanjutkan pola yang sudah dilakukan sejak pasukan Indonesia pertama kali menginvasi wilayah ini, yakni menahan, menginterogasi, dan menyiksa orang-orang untuk memperoleh informasi tentang gerakan prokemerdekaan dan para anggota jaringan klandestin. Para anggota masyarakat yang dicurigai membantu atau memiliki informasi tentang keberadaan para aktivis prokemerdekaan ditangkap secara sewenang-wenang. Penguasa juga menangkap para anggota CNRT, anggota klandestin, dan aktivis pemuda serta pelajar dalam usaha mendapatkan informasi dan mengidentifikasi para pemimpin gerakan prokemerdekaan. Penyiksaan sering digunakan untuk memperoleh informasi tersebut.

Pemindahan penduduk sipil dan penangkapan orang-orang yang lari

675. Setelah Jajak Pendapat, ratusan ribu orang mengungsi dari desa-desa mereka. Sebagian pergi sendiri ke Timor Barat atau ke gunung-gunung di Timor-Leste, sebagian yang lain dipaksa melintasi perbatasan. Para korban melaporkan bahwa mereka ditahan, baik untuk diungsikan secara paksa maupun ketika mereka mencoba untuk mengungsi atas keinginan sendiri.

Penahanan dan penyiksaan, November 1998 – Maret 1999

676. Pola-pola penahanan, penganiayaan, dan penyiksaan yang dipaparkan di atas sebenarnya sudah mulai sejak akhir 1998 ketika berbagai peristiwa politik terjadi menjelang dan setelah pengumuman Jajak Pendapat.

Sebelum pengumuman Jajak Pendapat

677. Penahanan sewenang-wenang mulai terjadi dan sering dilakukan langsung oleh militer yang bertindak sendiri. Komisi mendengar contoh sebuah kasus yang terjadi di Poemate di Desa Atabae (Atabae, Bobonaro) pada 9 November 1998. Jacinto Lobato dan tiga orang temannya Ernesto Gaspar, Domingos, dan Claudino diancam dengan senapan M-16 oleh Luis António, anggota Koramil Atabae dan Batalion Tempur Teritorial/BTT yang berbasis di Atabae.⁹¹⁸

678. Demikian pula pada akhir 1998 para anggota Falintil yang menghadiri sebuah acara tradisional di *aldeia* Holbese, Desa Leber (Bobonaro, Bobonaro) tiba-tiba dikepung oleh lebih daripada 20 tentara TNI dan para anggota Kodim1636/Maliana. Para tentara tersebut mulai menangkapi penduduk Holbese termasuk perempuan dan anak-anak muda. Keesokan harinya seluruh masyarakat dihukum. Agusta menuturkan kepada Komisi:

Keesokan paginya pukul 8, seluruh masyarakat dikumpulkan, lalu diberi pengarahannya oleh Januari, seorang anggota TNI. Mereka menghina kami dengan mengatakan: "Kalian mau merdeka?! Bikin korek api saja tidak bisa, kok mau merdeka!" Teman-teman yang ditangkap disiksa dengan cara tumbuk, tendang, diinjak-injak dengan sepatu boneng [sepatu lapangan militer]. Lima orang korban, termasuk suami saya José Vicente, wajahnya bengkak semua, darah mengalir melalui mulut, hidung, kepala dan juga ditikam dengan ujung senjata secara terus-menerus.⁹¹⁹

679. Paulo Morreira dan Vicente do Rosário menceritakan tentang penangkapan terhadap mereka pada Januari 1999 di Turisca (Manufahi) oleh sepuluh anggota Kopassus dan empat anggota militer Timor: T570, T571, T572, dan T573. Orang-orang ini memukul mereka di bagian kepala dan punggung dengan popor senapan dan kemudian menyerahkan mereka kepada Koramil, di mana mereka ditampar lagi oleh komandan Koramil. Kemudian para tentara membawa mereka ke markas Yonif 745, di tempat itu para anggotanya memukuli mereka begitu kerasnya sehingga tulang punggung Paulo Morreira retak. Ia mengalami luka parah di bagian kepala dan kehilangan pendengaran di satu telinganya.⁹²⁰

680. Militer juga mengorganisasi kembali paramiliter di Baucau (Tim Saka, Makikit, dan Tim Sera) dan Lospalos (Tim Alfa) dan membentuk milisi-milisi baru seperti Mahidi di Distrik Ainara, Halilintar di Subdistrik Maliana (Bobonaro), dan Besi

* Antara lain M284 anggota TNI asal Tapo, M285 anggota TNI asal Holsa, dan M286 anggota TNI asal Oe-lau.

Merah Putih (BMP) di Distrik Liquiçá. Anggota-anggota pertama dari milisi-milisi baru ini adalah mereka yang sudah lama menjadi anggota paramiliter dan kakitangan militer Indonesia yang lain. Contohnya, Cancio Lopes de Carvalho, mantan pemimpin Tim Sukarelawan yang pernah melakukan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan secara luas di Ainaro pada awal 1990-an, kemudian memimpin Mahidi. Setelah kelompok-kelompok tersebut dibentuk, penahanan sewenang-wenang, penganiayaan, dan penyiksaan banyak terjadi untuk merekrut lebih banyak lagi anggota dan menunjukkan kekuasaan mereka di daerah tersebut.

681. Pada awal Januari, dalam salah satu rapat pembentukan yang diadakan milisi Besi Merah Putih⁹²¹ di Desa Guguleur (Maubara, Liquiçá) disusun rencana operasi lanjutan BMP di Subdistrik Maubara. Masyarakat Guguleur menceritakan bagaimana, pada hari berikutnya para anggota BMP menangkap lima orang dan memukuli mereka. Empat orang dipukuli sedemikian parahnya sehingga mereka harus dirawat di Dili; orang kelima ditahan di pos milisi.⁹²²

682. Kelompok-kelompok besar BMP, dalam jumlah 30-an atau lebih anggota, bersama dengan staf sipil dari Koramil, kemudian menangkap banyak lagi orang lain di daerah tersebut, sebagian besar adalah anggota CNRT. Komisi menerima satu pernyataan mengenai penahanan yang terjadi di Guguleur pada Januari 1999 dan lima pada Februari 1999. Sebagai tambahan, ada lima pernyataan yang diterima dari Vatuboro, empat dari Vatuvuo, dan enam dari Guico (semua di Maubara, Liquiçá). Para pelaku orang Timor yang disebut dalam pernyataan-pernyataan ini antara lain T574, T575, T576, T577, T578, T579, dan T580.⁹²³ Para anggota Gadapaksi dan Batalion 143 juga menyerang penduduk Guguleur dengan tongkat dan senjata tajam, seperti tombak dan parang.⁹²⁴ Banyak penduduk desa yang melarikan diri dari Subdistrik Maubara.

683. Komisi juga mendengar bahwa 40 anggota milisi Naga Merah menyerang rumah kepala desa Vatuvou, Manuel Almeida. Ia sedang tidak berada di rumah pada saat penyerangan terjadi tetapi para pemuda penyerangnya menggunakan pisau, batu, batang besi, dan M-16 untuk menghancurkan rumah dan mengancam keluarganya. Tiga anggota keluarganya diculik dan dibawa ke pos Naga Merah di Koramil 02 Maubara di mana mereka disiksa.⁹²⁵ Penangkapan terus terjadi sampai Februari.

684. Paulo dos Santos, bekas anggota klandestin, mengatakan kepada Komisi bahwa pada 2 Januari ia ditangkap oleh empat orang Marinir TNI di Ainaro. Mereka memerintahkannya keluar dari sebuah minibus umum kemudian membawanya ke markas Marinir di Cassa (Ainaro, Ainaro). Dia kemudian dipukuli dan ditendangi sampai telinganya berdarah dan ia pingsan selama sekitar satu jam. Pada tengah malam, dengan kedua jempol tangan dan kakinya diikat menjadi satu serta matanya ditutup, ia dibawa ke sebuah gedung dekat Sungai Cassa. Ia mengisahkan pengalamannya:

Mereka tahan saya selama dua hari, mulai saya diinterogasi mengenai partisipasi saya dalam kegiatan 'ukun rasik an' [perjuangan kemerdekaan]. Karena saya takut, saya mengatakan apa yang saya perbuat. Anggota Marinir mengatakan pada saya, "Kamu jangan

terlibat lagi dalam demonstrasi berhubungan dengan referendum seperti kejadian SPII di mana para pemuda memukul komandan SGI, saat itu Uskup Carlos Ximenes Belo meresmikan kapela SPII?" Lalu saya menyahut bahwa saya tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan seperti itu. Setelah dua hari, oom saya Agostinho Sarmiento, Camat Hato Udo datang keluaran saya, kemudian bawa ke Hato Udo. Saya sembunyi selama satu bulan.⁹²⁶

Setelah pengumuman Opsi Kedua

685. Pada 27 Januari 1999 keputusan untuk melaksanakan dua opsi tentang masa depan politik Timor-Leste diumumkan. Semakin banyak milisi dibentuk di berbagai distrik dan subdistrik di seluruh Timor-Leste (lihat Bagian 4: Rezim Pendudukan, untuk daftar yang lebih lengkap tentang milisi).

686. Pada minggu berikutnya terjadi sejumlah penangkapan di Maubara (Liquiçá) oleh milisi BMP. Dalam beberapa kejadian, milisi bertindak sendiri. Contohnya, Mário da Costa, seorang bekas anggota CNRT, mengatakan kepada Komisi bahwa ia ditangkap di rumahnya di Vatuboro (Maubara, Liquiçá) pada 30 Januari oleh dua anggota milisi BMP yang dikenal sebagai T578 dan T579. Pada waktu penangkapan ia ditendang di bagian leher dan dipukuli dengan rantai sepeda motor. Kemudian ia dibawa ke pos milisi di mana ia dipukuli lagi dan diinterogasi oleh T580, seorang komandan milisi.

687. Komisi menerima setidaknya lima pernyataan yang menggambarkan kasus-kasus di mana milisi BMP bekerjasama erat dengan TNI, Gadapaksi, dan polisi.* Dalam satu kasus tanggal 16 Februari 1999, João Soares ditangkap di rumahnya di Manukabia (Maubara, Liquiçá) oleh empat orang anggota TNI, T581, T582, T583, dan T584 dan dua anggota milisi BMP, T585 dan T586. Mereka memukulinya dengan popor senapan, meninju, dan menamparnya, sehingga mengakibatkan luka-luka di bagian kepala. Kemudian ia dibawa ke kantor polisi Maubara dan di dalam perjalanan T585 dan T586 menemukannya dengan panah hingga ia banyak mengeluarkan darah. Akhirnya ia dibawa ke sebuah pos polisi di Liquiçá untuk ditahan dan diinterogasi selama delapan hari.⁹²⁷ Pada 5 Februari, Ana Maria Mouzinho ditangkap di Holbolu (Beco I, Suai, Covalima) setelah informasi dari seorang informan Timor T587 sampai kepada para anggota Mahidi, termasuk T587 dan T589 (istri kepala desa Raimea). Ana Maria dipukuli, dihantam dengan sepucuk senapan, dan dibawa ke markas Mahidi di Zumalai di mana ia diinterogasi, diancam mati, dan dihantam lagi dengan sepucuk senapan dan diperintahkan menggiling padi untuk milisi. Ia ditahan di sana selama dua hari.⁹²⁸

688. Selain mendorong opsi otonomi, para anggota milisi yang baru direkrut sering diperintahkan melakukan beberapa jenis kerja paksa, seperti melakukan kegiatan

* Pernyataan-pernyataan HRVD 4630; 1001; 0225; 5908; 2867 (Joanico Marcal, ditangkap oleh para anggota TNI dan kemudian diserahkan kepada milisi BMP).

kebersihan, memotong rumput, memperbaiki pipa-pipa rusak, mencari kayu bakar atau menjaga pos milisi.⁹²⁹ Pada 11 Maret, Agostinho ditangkap oleh empat anggota milisi Mahidi, T590, T591, T592, dan T592 di Mape (Zumalai, Covalima). Mereka menginterogasinya sepanjang malam setelah itu menyuruhnya melakukan berbagai tugas sebelum dibebaskan. Dia menuturkan kepada Komisi:

Saya disuruh memperbaiki jembatan Loumea, memangkas rumput, dan menebang kayu untuk membangun pos Mahidi di Kulu Oan, Zumalai. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1999, saya dibawa oleh Mahidi ke Zumalai. Saya juga disuruh membersihkan puntung rokok di sekeliling markas Mahidi dan menggali lubang. Saya selama satu minggu dalam penahanan di markas Mahidi.⁹³⁰

689. Masyarakat Rai Fun (Maliana, Bobonaro) menceritakan kepada Komisi bahwa pada Februari 1999, para anggota Kodim Maliana secara khusus mencari para pemuda berambut panjang. Manuel Laka Suri, Domingos Salvador, dan João Barreto, semuanya laki-laki berambut panjang, ditangkap dan rambut mereka dipotong dengan sebilah pisau. Mereka ditangkap dan direndam di sawah yang sudah diairi. Mereka kemudian ditelanjangi dan dikurung dalam sebuah ruangan gelap penuh air sehingga mereka tidak dapat duduk ataupun tidur.⁹³¹

Dilor, Viqueque, 20 Maret

690. Milisi Tim Makikit dilaporkan mulai merekrut anggota pada Maret 1999. Pada 20 Maret, setelah sebuah pertemuan di pos TNI di Dilor (Lacluta, Viqueque), para anggota baru mulai menyerang penduduk dan rumah-rumah mereka di desa-desa sekitar, memukuli dan mengancam orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan. Sekitar 160 orang ditahan untuk waktu yang singkat di Koramil Lacluta di Dilor dan sekitar 500 orang lainnya lari dari rumah mereka karena takut.⁹³²

691. Artur de Carvalho, pendukung kemerdekaan, adalah salah satu korban penyerangan ini. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa para anggota milisi menyerang rumahnya di Laline (Lacluta, Viqueque), merusak atap, pintu, dan jendela-jendela. Kemudian mereka membawanya ke Koramil dan menyerahkannya kepada seorang anggota milisi T594 dan komandan Koramil, Sersan Mayor T598. Ia mengatakan setidaknya 64 orang lainnya ditahan di Koramil tersebut pada waktu itu. Rumah-rumah dan kios-kios mereka juga telah dihancurkan. Para tahanan ditahan selama 24 jam tanpa diberi makan dan kemudian dibebaskan pada 22 Maret 1999. Ia menceritakan kepada Komisi setidaknya satu orang tahanan perempuan, MN, dianiaya ketika dalam tahanan. Roknya ditarik hingga lepas dan alat kelaminnya dipegang.⁹³³

692. Tujuh orang laki-laki dan António melarikan diri ke hutan. Ketika mereka kembali dua minggu kemudian, mereka ditangkap oleh Babinsa setempat, T596 dan T597, yang kemudian membawa mereka ke Koramil. Komandan Koramil T598 menginterogasi mereka dan membebaskan mereka pada malam itu juga. Namun,

keesokan harinya, ketika mereka lapor diri ke Koramil, T600 dan komandan Koramil T598 kembali menahan mereka dan mereka dipaksa bekerja untuk militer termasuk mencangkul sawah, memotong kayu dan bambu, membangun pagar, memasang atap, dan menanam sayuran selama dua setengah bulan.⁹³⁴

Maliana, Bobonaro, Maret 1999

693. Pada 22 Maret, anggota TNI memukuli seorang pemimpin terkemuka CNRT, José Andrade da Cruz, di depan umum dan menyeretnya sepanjang kota ke markas TNI di Maliana (Bobonaro). Pemukulan di depan umum terhadap dia menjadi contoh bagi para pendukung kemerdekaan lainnya dan menyebarkan ketakutan yang luas di masyarakat.⁹³⁵

694. Untuk menghindari situasi keamanan yang memburuk, banyak anggota CNRT di Subdistrik Maliana mengungsi ke pos polisi Maliana dan gereja-gereja setempat atau lari ke Dili.⁹³⁶ (Lihat Bab 7.3: Kelaparan dan pemindahan paksa.)

Zumalai, Covalima, Maret 1999

695. Pada 23 Maret, Celestino Pereira de Araújo dan sembilan orang temannya ditangkap oleh Milisi Mahidi di Desa Zulo (Zumalai, Covalima) dan dibawa ke rumah anggota Mahidi Vasco da Cruz. Kesepuluh orang tersebut kemudian diserahkan kepada anggota BTT Yonif 144 yang membawa mereka ke markas BTT. Mereka diinterogasi, dipukuli, dan ditendangi kemudian pada malam hari didatangi oleh camat Zumalai. Dia mengatakan kepada Komisi:

Pada malam hari, Camat T601 datang dan menanyakan siapa nama kami. Setelah itu dia taruh oli kotor di kepala saya, menghina kami dengan bilang: “Mukamu seperti monyet, maunya merdeka!” Lalu dia menyuruh kami sepuluh orang untuk meminum kembali kami punya ludah yang dicampur dalam satu gelas, lalu diminum kembali secara bergantian.⁹³⁷

Penahanan dan penyiksaan selama April 1999

696. Jumlah orang yang ditahan serta jumlah orang yang mengalami penyiksaan dan penganiayaan memuncak pada April 1999.

697. Kebanyakan penangkapan dan penahanan yang melibatkan semacam interogasi terjadi pada April dan Mei 1999. Seperti pada tahun-tahun awal pendudukan, para anggota atau yang diduga sebagai anggota gerakan klandestin diinterogasi tentang kegiatan mereka atau kegiatan teman-teman mereka dalam jaringan klandestin,⁹³⁸ juga tentang keberadaan atau sejauh mana kontak mereka dengan anggota keluarga mereka dalam Falintil.⁹³⁹ Sebagian ditanya mengenai keberadaan anggota-anggota Falintil tertentu⁹⁴⁰ atau mengenai persediaan senjata.⁹⁴¹

698. Milisi-milisi baru dibentuk, seperti Milisi Sakunar di Oecussi, dan milisi-milisi yang telah dibentuk sebelumnya secara formal diresmikan. Sebagai contoh, Milisi Laksaur dibentuk pada Januari tetapi baru memulai operasi-operasi berskala penuh dan secara intensif merekrut anggota pada pertengahan bulan April ketika milisi tersebut diresmikan.⁹⁴²

699. Milisi Mahidi, yang sebagian besar aktif di Distrik Ainaro, juga memiliki cabang di Subdistrik Zumalai (Covalima) yang dipimpin oleh Vasco da Cruz dan Domingos Alves, keduanya kepala desa.⁹⁴³ Anggota milisi tersebut juga menangkap penduduk dan membawa mereka ke markas Zumalai.⁹⁴⁴ M122 secara langsung terlibat dalam berbagai penahanan dan sejumlah pemukulan terhadap para tahanan.⁹⁴⁵ Komisi menerima tujuh pernyataan mengenai para individu yang ditahan oleh Mahidi. Semua tahanan diancam dan dipukuli, bahkan disiksa, dan setelah itu dipaksa bergabung dengan Milisi Mahidi.⁹⁴⁶

Liquiçá, April 1999

700. Pada minggu pertama bulan April, Milisi BMP, polisi, dan militer melaksanakan operasi gabungan untuk menemukan semua pendukung kemerdekaan di Subdistrik Liquiçá dan Maubara. Domingos de Jesus da Costa, contohnya, menceritakan bagaimana ia dan enam orang lainnya yang berasal dari Lailok Lara di Desa Dato (Liquiçá, Liquiçá) ditahan pada 5 April oleh pasukan gabungan yang terdiri atas anggota Kodim Timor T612, prajurit T613 dan T614, anggota polisi Timor T615, T616, T617, dan T618, anggota Koramil Timor T619, dan seorang pegawai negeri T620. Mereka ditahan selama beberapa jam dan selama itu mereka dipaksa berbaring di tengah jalan utama. Seorang korban, Fernando da Costa, dipukuli dengan popor senapan.⁹⁴⁷

701. Pada hari yang sama, menurut cerita Mamo Ana, ia dan keluarganya diserang oleh empat anggota milisi BMP di Fukelara, Desa Dato. Mereka membunuh suaminya, Maubusa, dan membawa ia dan keluarganya ke Kodim 1638/Liquiçá, tempat mereka ditahan selama sehari-semalam. Keesokan harinya Bupati Liquiçá T621 dan beberapa anggota Kodim Liquiçá memindahkan keluarga tersebut ke Maubara selama sebulan.⁹⁴⁸

702. Pada 6 April 1999 penduduk lari berlindung ke Gereja Liquiçá. Milisi BMP berkumpul di luar gereja tersebut kemudian masuk untuk membunuh banyak orang yang berlindung di sana, sementara para anggota TNI dan polisi hanya menyaksikan tanpa berbuat apa-apa (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Selain mereka yang mati, banyak juga orang yang mengalami penganiayaan dan pelecehan. Ramiro Ximenes dos Santos yang ketika pembantaian terjadi berusia 71, mengisahkan:

Pada tanggal 6 April saya mengungsi ke Gereja Liquiçá karena para milisi BMP mulai melakukan operasi dan mengadakan tindakan brutal di sekitar wilayah Liquiçá untuk mencari orang-orang prokemerdekaan. Sesampainya saya di Gereja Liquiçá, saya berdiri di depan gereja tersebut dan melihat milisi BMP sedang menuju ke gereja.

Sehingga saat itu juga saya langsung lari masuk ke dapur [kediaman] pastor Paroki Liquiçá untuk mengambil sebuah pisau guna membela diri. Tapi tiba-tiba ada seorang milisi BMP telah berdiri di belakang saya dan langsung memukul saya dengan menggunakan sebatang kayu pada bagian belakang saya hingga saya terjatuh dan pingsan. Kemudian dia menikam saya dengan pisau di muka saya sehingga robek dan berdarah. Setelah itu dia meninggalkan saya dalam keadaan pingsan dan berdarah di Gereja Liquiçá. Kemudian istri saya datang dan mengajak saya ke Kodim Liquiçá...di sana seorang tentara Kodim bernama Mateus memberi saya sehelai kain Timor untuk membalut luka saya supaya tidak berdarah dan menyuruh kami pulang.⁹⁴⁹

703. Setelah pembantaian terjadi, milisi BMP terus menangkapi para pendukung kemerdekaan di berbagai tempat di distrik tersebut. Masyarakat Loidahar (Liquiçá, Liquiçá) mengatakan bahwa 50 orang dibawa dari desa itu dan ditahan kemudian disiksa oleh para anggota BMP. Para gadis secara rutin dipaksa ikut pesta dansa dengan milisi.⁹⁵⁰ Banyak dari para tahanan awalnya dikurung di rumah bupati Liquiçá, T621.⁹⁵¹ Mereka kemudian dipindahkan ke Kota Maubara dan ditahan di markas BMP selama kira-kira dua bulan.⁹⁵²

704. Sejumlah pemuda dari daerah lain bergabung dengan milisi Aitarak setelah pembantaian pada April 1999, untuk menyelamatkan diri.⁹⁵³

Ermera, April 1999

705. Ermera merupakan tempat terjadinya berbagai pelanggaran berat hak asasi manusia pada 1999, termasuk sejumlah besar pembunuhan. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.) Ermera juga merupakan salah satu distrik yang dilaporkan mempunyai jumlah penahanan terbesar pada 1999, yakni 235 kejadian dari 220 pernyataan yang dilaporkan kepada Komisi.

706. Lima kelompok milisi beroperasi di daerah Ermera dan gerakan prokemerdekaan sangat aktif di distrik ini. Komisi mendengar bahwa para anggota CNRT menahan seluruh penduduk *aldeia* Ilimanu di kantor desa Manusae (Hatolia, Ermera) pada 1 April dan menahan mereka di sana selama seminggu. Mereka memukuli para laki-laki di kelompok tersebut karena mereka dicurigai sebagai anggota milisi Naga Merah.⁹⁵⁴ Pada April 1999, di Subdistrik Railaco, anggota CNRT Dinis dos Santos dan 43 orang lainnya menulis deklarasi kepada Bupati Ermera untuk mengemukakan penolakan mereka terhadap otonomi.

707. Para pendukung pro-otonomi dan aparat penguasa Indonesia menanggapi aksi-aksi tersebut. Pada 14 April milisi Naga Merah menangkap para anggota klandestin dan penduduk di Desa Manusae.⁹⁵⁵ Pada 26 April 1999, SGI mengumpulkan semua penduduk Kukara (Desa Manusae, Hatolia) untuk mendengarkan instruksi. Dua anggota klandestin yang dikenal dengan nama Marito dan António kemudian ditangkap dan dipukuli.⁹⁵⁶ Di Railaco komandan Koramil, T668, menangkap Armindo Soares, satu dari 44 orang yang menulis deklarasi tersebut. Ia dipukuli

amat parah di Koramil tersebut. Komandan Koramil itu kemudian memerintahkan para anggota Koramil untuk memburu dan menangkap 43 orang lainnya yang menandatangani surat itu.⁹⁵⁷ Pernyataan oleh Dinis dos Santos menjelaskan perlakuan anggota TNI terhadap mereka:

Ketika sampai di sana, kami disuruh berbaris kemudian dipukul, ditinju, dan ditendang. Kemudian mereka pukul kepala Estevão dengan pistol, kakinya luka berat dan Estevão dipukul dengan kursi hingga kursinya patah. Danramil T668 menyuruh anggota TNI T669, T670, T671, T672, T673, dan T674 memukul kami. T670 mengambil sebuah pisau untuk menikam Estevão tapi untungnya T668 berteriak [ke T670], kalau tidak Estevão mati. Setelah kami dibebaskan [kami] kembali ke Tocoluli, Komandan T668 menyuruh kami 44 orang membayar denda dengan uang sebesar Rp2.500.000 dan memotong kayu lima meter kubik dengan ukuran balok 5/7 dan papan.⁹⁵⁸

708. Mereka kemudian dipaksa bergabung dengan kelompok milisi Darah Merah dan harus menghadiri pertemuan-pertemuan kelompok tersebut di Ermera.⁹⁵⁹

709. Jelas bahwa militer telah mengidentifikasi orang-orang prokemerdekaan untuk ditahan dan disiksa. Cudinho Manegas mengatakan kepada Komisi bahwa pada April Komandan Koramil Railaco dan Babinsa, T677, mendatangi rumah Hermenegildo, menuduh dia sebagai anggota klandestin dan mencari seorang anggota klandestin bernama Martinho. Ketika mereka mendapati bahwa Martinho telah melarikan diri, mereka mulai memukuli Hermenegildo. Tak lama kemudian Martinho kembali dan menyerah dan Babinsa T677 tersebut membebaskan Hermenegildo dan ganti memukuli Martinho dengan popor senapan.⁹⁶⁰

710. Komandan SGI di Hatolia, T678, disebut dalam sejumlah kejadian penangkapan di subdistrik itu.⁹⁶¹ Anselmo Soares menceritakan bagaimana dia ditangkap bersama Armando dos Reis, Alcino, dan Abilio oleh T678 dan dua anggota SGI di Desa Ailelo (Hatolia, Ermera) dan dibawa ke Hatolia untuk diinterogasi. Armando dos Reis dipukuli bertubi-tubi sepanjang interogasi.⁹⁶² José Lemos menceritakan bagaimana ia dan Bonifacio dos Reis ditangkap pada 10 April oleh T678 dan ditahan di Koramil Hatolia. Di tempat itu, kepala José Lemos digunduli dan kulit kepalanya disayat dengan silet. Kedua korban tersebut anggota klandestin.⁹⁶³

711. Kejadian kekerasan lain juga meningkatkan ketegangan di distrik tersebut. Pada 10 April di Gleno, ibukota Distrik Ermera, militer membakar markas CNRT dan membunuh seorang tokoh CNRT dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, António Lima.⁹⁶⁴ Banyak orang lari dari Ermera setelah pembunuhan dan mencari perlindungan pada Falintil pada 19 April. Dalam usaha untuk menangkap anggota klandestin lainnya, SGI dan BTT setempat melakukan penangkapan besar-besaran sampai di luar daerah itu.⁹⁶⁵ Tampaknya milisi tidak terlibat dalam berbagai penangkapan ini. Contohnya, André Madeira menceritakan tentang enam anggota klandestin dari Ermera, termasuk dirinya sendiri yang ditangkap di rumah bupati Ermera pada 10 April oleh dua anggota SGI dan seorang

petugas kepolisian.* Mereka dibawa ke Kodim Ermera di mana mereka dipukuli, ditendang, dan ditinju oleh sejumlah pelaku termasuk polisi, SGI, dan BT setempat.⁹⁶⁶ João de Jesus Soares Valeres menceritakan kepada Komisi bahwa ia ditangkap oleh anggota SGI T682 dan T683, kemudian di bawah ancaman akan dibunuh, ia disuruh mencari Komandan Falintil Ernesto Fernandes (Dudu). Ia memalsukan sepucuk surat dari komandan tersebut dan dibebaskan.⁹⁶⁷

Covalima, April 1999

712. Beberapa kelompok milisi beroperasi di Distrik Covalima yang berbatasan dengan Timor Barat. Milisi Mahidi yang berbasis di Ainaro memiliki cabang di Subdistrik Zumalai. Unit Kejahatan Berat dari Kantor Kejaksaan Agung Timor-Leste telah mendakwa tujuh bekas komandan milisi Mahidi untuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah mereka lakukan di Zumalai, mencakup penahanan dan penyiksaan terhadap para pendukung kemerdekaan di tiga pusat penahanan di subdistrik tersebut. Dakwaan tersebut menyatakan bahwa:

Penahanan dan pemenjaraan adalah salah satu dari sarana yang digunakan untuk menganiaya orang-orang sipil prokemerdekaan yang dipilih secara sistematis, ditahan dan dipenjarakan, berdasarkan alasan politik. Pusat penahanan utama adalah rumah Vasco da Cruz [di desa Zulo] di mana 45 orang ditahan. Di seberang jalan dari rumah Vasco da Cruz terletak gedung pemerintah Indonesia, di mana Lino Barreto tinggal. Lino Barreto menahan sedikitnya enam orang di rumahnya. Satu tempat tahanan juga ada di *Aldeia* Beilaco [Raimea, Zumalai], di rumah Napoleão dos Santos, alias Napoleão Alves. Napoleão dos Santos alias Napoleão Alves menahan sedikitnya 12 orang di rumahnya. Para tahanan ini disiksa secara fisik dan psikis, termasuk pemukulan dan penyiksaan, dan tidak memperoleh kebutuhan dasar, seperti makanan, air, dan tempat tinggal yang memadai. Kamp-kamp penahanan itu terlalu banyak orang di dalamnya, tanpa sanitasi, dan tanpa pelayanan medis.⁹⁶⁸

713. Komisi menerima sejumlah pernyataan yang menyebutkan tentang penahanan dan penyiksaan penduduk sipil di Zumalai, khususnya pada April. Menurut cerita Leontino Moniz, pada 12 April lima anggota Mahidi menangkapnya di Boro dan membawanya ke markas Mahidi di Zumalai. Di sana, T602, komandan Mahidi, mulai memukuli kepalanya, sementara yang lain memukulinya dengan potongan kayu. Ia diinterogasi, dipukuli, dan ditinju hingga jatuh pingsan. Kemudian ia dan yang lainnya yang dituduh mendukung kemerdekaan diperintahkan berdiri berjajar untuk dicukur rambutnya. Mereka baru dibebaskan ketika UNAMET tiba di wilayah itu. Sebelum itu, T602 dan para anggota milisi, T643 dan T644, sempat mengatakan

* Camat Ermera, Constantino Soares, tidak memberikan dukungan aktif untuk tujuan prointegrasi dan tentu saja membiarkan para anggota CNRT yang berada dalam bahaya bersembunyi di rumahnya. Lihat Robinson, hal. 161.

kepada mereka bahwa jika otonomi kalah, mereka semua akan dibunuh termasuk para istri dan anak-anak mereka.⁹⁶⁹

714. Komisi menerima enam pernyataan tentang pusat penahanan di Beilaco, Desa Raimea (Zumalai).⁹⁷⁰ Sebagian besar penahanan dan pengalaman penyiksaan dikaitkan dengan para anggota Mahidi, T645, T646, T647, dan T648. Luis Soares dihantam dengan popor senapan dan ditendang dengan sepatu bot tentara, kemudian kedua tangannya diikat dan ia dibawa ke pos Mahidi di Beilaco. Di pos tersebut ia dipukuli berulang kali oleh T645 dan T646, menyebabkan sakit punggung yang selalu kambuh.⁹⁷¹

715. Di Subdistrik Suai (Covalima) milisi Laksaur bersama polisi dan tentara meneror penduduk. Carlos Pereira menggambarkan penangkapan dan penyiksaan yang dialaminya pada 24 April di Suai kota (Suai, Covalima):

Anggota milisi Laksaur, T654, T655, dan T656 dan seorang anggota TNI Timor, T657 menangkap saya di Desa Akar Laran karena saya prokemerdekaan. Saya hampir saja mati dibunuh dengan parang oleh T658, namun dihalau oleh T659 sehingga ia hanya mendorong saya ke pintu. Selanjutnya T658 mulai memukul saya, meninju dan memukul wajah dan telinga, hingga hidung dan telinga saya berdarah. Saya terjatuh ke tanah tapi bangun lagi. Saya dipukuli di wajah, darah mengalir dari mulut saya, dan saya jatuh lagi untuk kedua kalinya. Lalu T654 mengangkat saya dan buang ke T657 yang mengikat dari tangan ke leher saya dengan tali kabel. Saya dipukul oleh tiga orang anggota Laksaur selama 20 menit. Setelah itu saya disuruh dua anggota Laksaur dan anggota TNI berjalan kaki dari Akar Laran sampai ke pertigaan Akar Laran. Saya melihat T658, anggota polisi, sudah menunggu saya dengan senjata dan sebuah mobil Kijang. Lalu saya disuruh naik Kijang itu dan mereka membawa saya, serahkan ke kepala desa Suai Loro, T662, di rumahnya.

Sampai di rumah kepala desa, banyak milisi yang duduk mengelilingi saya. Tidak lama kemudian kakak-beradik kembar dari Suai Loro, namanya saya tidak tahu, mulai pukul saya dan Agustinho, pukul kami berdua dengan tangan di mulut, tendang di dada, pukul badan kami selama 20 menit. Lalu kepala desa T662 bilang bahwa saya seorang radikal dari pihak prokemerdekaan. Kepala desa dengar informasi ini dari T664, T665, dan T666. Tidak lama kemudian saya dan Agustinho dibawa ke Polsek di Suai Loro dan diserahkan kepada anggota polisi dari Indonesia. Saya tidak tahu namanya. Kami dimasukkan ke dalam sel, saya ditinju satu kali di mulut.⁹⁷²

Cailaco, Bobonaro, April 1999

716. Setelah pembunuhan Manuel Gama, seorang tokoh pro-otonomi dan seorang anggota Koramil Railaco pada 12 April, dalam situasi yang masih diperdebatkan,⁹⁷³

militer melaksanakan sebuah operasi yang brutal di Subdistrik Cailaco (Bobonaro) untuk menemukan para pembunuh.* Kasus ini memberikan bukti kuat mengenai kerjasama yang erat antara para anggota milisi dan perwira TNI dalam melancarkan teror di masyarakat. Komandan SGI di Marco, ibukota Cailaco, T623, memerintahkan TNI dan anggota milisi Halilintar melakukan penyisiran. Mereka menangkap sekitar 30 penduduk Marco, termasuk perempuan dan anak-anak, dan membawa mereka ke Koramil Cailaco di Marco. Perempuan dan anak-anak dipisahkan dari laki-laki dan dibebaskan setelah beberapa hari. Tetapi para tahanan laki-laki dipukuli hingga babak belur. Kodim Bobonaro di Maliana dan komandan milisi [João Tavares] T1, dilaporkan secara spesifik memerintahkan pemukulan tersebut. Dakwaan Cailaco yang diajukan pada 3 Februari 2001 menggambarkan pemukulan yang terjadi:

Para tahanan disuruh berbaring di lantai kemudian TNI dan milisi yang ada di sana meninju dan menendang mereka dengan sepatu. Mereka juga dipukuli dengan popor senapan ketika ditanyai tentang pembunuhan Manuel Gama.⁹⁷⁴

717. Komisi telah menerima enam pernyataan dari orang-orang yang ditahan selama operasi ini. Para deponen menjelaskan bagaimana para penduduk dan pegawai negeri sipil diperintahkan berkumpul di rumah almarhum Manuel Gama, di mana mereka diberi tahu bahwa para pendukung kemerdekaan yang hadir akan dibunuh seperti tiga orang yang telah dibunuh di Purugoa (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Sebagian kemudian ditahan di Koramil Cailaco⁹⁷⁵ atau pos-pos BTT di sekitar Purugoa dan Bilimau (Cailaco, Bobonaro).⁹⁷⁶ Pernyataan-pernyataan menyebutkan beberapa pelaku, termasuk Koramil, milisi Halilintar, milisi Guntur Merah Putih, polisi Cailaco, dan pasukan TNI seperti BTT 143.⁹⁷⁷

718. Dalam satu kasus yang terjadi pada 13 April, T624 dan tiga orang anggota milisi Dadurus Merah Putih (DMP) menangkap seorang pejabat CNRT, Adriano João, di rumah saudara perempuannya di Subdistrik Cailaco. Mereka memukuli, meninju, dan menggiringnya ke rumah T1 di mana ia kembali dipukuli dan ditendang, sampai beberapa tulangnyanya patah.⁹⁷⁸

Oecussi, April 1999

719. Kelompok milisi Sakunar dibentuk pada 14 April 1999, di Oecussi.⁹⁷⁹ Kelompok tersebut dibentuk dengan dukungan penuh dari Gubernur Timor Timur Abilio Osório Soares, Bupati Dili Domingos Soares, pemimpin milisi nasional João Tavares dan Eurico Guterres, serta pemimpin lokal Laurentino Soares (Moko) dan Simão Lopes.[†]⁹⁸⁰ Anggota milisi Sakunar Jacinto Colo menjelaskan pertemuan peresmian tersebut:

.....
* Lihat juga Pernyataan HRVD 9167 yang menyatakan bahwa operasi dilaksanakan karena mereka tidak ikut dalam pertemuan pelantikan anggota BMP pada awal bulan itu.

† Sejak tanggal pembentukannya (1 Mei 1999), Sakunar menerima dukungan politik dan finansial penuh dari Bupati, Kapolres, dan Komandan Kodim. [Robinson, Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004 hal. 184].

Tanggal 14 April 1999, saya didatangi oleh kepala desa Nipani, Candido Meko, dengan maksud pergi ke rumah Bupati Filomeno Mesquita dalam rangka pertemuan tentang pembentukan tim milisi Sakunar di Ambeno. Orang-orang yang berkumpul di antaranya Candido Meko, Elvis Lopes, Simão Lopes, Belarmino da Costa, Laurentino Soares alias Moko, dan Carlos Pereira. Dalam pertemuan tersebut dibentuk struktur dan komposisi di mana Simão Lopes diangkat sebagai panglima Sakunar dan Candido Meko sebagai komandan Sakunar untuk Desa Sakato. Saya juga menjadi komandan.⁹⁸¹

720. Penahanan, penangkapan, dan penyiksaan dilaporkan meningkat tajam di seluruh Oecussi pada April⁹⁸² dan berlanjut hingga Mei.⁹⁸³

721. Penangkapan banyak terjadi dalam operasi-operasi di mana sejumlah besar anggota milisi, dibantu oleh anggota Kodim, bergerak dari desa ke desa untuk merusak rumah orang-orang yang dicurigai sebagai anggota CNRT. Komisi menerima setidaknya enam laporan tentang milisi Sakunar yang bertindak dalam menangkap dan memaksa orang-orang yang dicurigai sebagai anggota CNRT untuk bergabung dengan milisi tersebut, khususnya sepanjang April 1999.⁹⁸⁴ Komisi menerima enam laporan tentang sebuah operasi yang dipimpin oleh Komandan milisi Sakunar T603 pada 22 April 1999 di mana banyak dari mereka yang ditangkap dibawa ke rumahnya di Desa Cunha (Pante Makassar). Mereka melaporkan telah dipukuli oleh para anggota milisi dan dianiaya.⁹⁸⁵ Menyusul sebuah operasi penangkapan lain pada April yang dipimpin oleh seorang polisi T640, banyak tahanan dibawa ke kantor desa Abani (Passabe, Oecussi),⁹⁸⁶ rumah T640,⁹⁸⁷ atau kantor Polres.⁹⁸⁸

722. Penangkapan massal yang lain terhadap para pemimpin dan anggota CNRT terjadi pada pertengahan April di Desa Abani (Passabe, Oecussi). Masyarakat menceritakan bahwa sekitar 42 orang yang terkait dengan CNRT dibawa ke rumah pemimpin milisi dan kepala desa T604 dan Koramil di mana mereka dipukuli dengan pentungan kayu. Beberapa orang dipukuli begitu kerasnya sehingga pingsan.⁹⁸⁹

723. Milisi Sakunar bertanggung jawab atas sebagian besar penangkapan yang dilaporkan kepada Komisi yang terjadi di Oecussi pada 1999. Kebanyakan penangkapan semacam itu terjadi di bawah komando para pemimpin milisi seperti Kepala Desa Cunha, T603,⁹⁹⁰ Kepala Desa Abani, anggota polisi T604,⁹⁹¹ Babinsa T609,⁹⁹² dan pegawai negeri T610.⁹⁹³ Komandan Koramil T611 juga terlibat dalam banyak penahanan sewenang-wenang dan bertindak dalam koordinasi dengan para komandan milisi.⁹⁹⁴ Para korban dalam kasus-kasus yang dilaporkan kepada Komisi adalah para anggota CNRT ataupun orang-orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan gerakan klandestin.

Dili, 17 April 1999

724. Seorang anggota milisi Sakunar mengatakan kepada Komisi tentang pawai akbar milisi di Dili pada 17 April 1999 dan kekerasan yang terjadi setelah pawai tersebut:

Tanggal 17 April 1999, saya bersama 40 orang milisi Sakunar dari kampung Sakato di Oecussi mengikuti upacara akbar pengukuhan milisi prointegrasi [PPI] di Dili di bawah pimpinan Panglima João Tavares dan Wakil Panglima Eurico Guterres, yang sekaligus menjadi komandan Aitarak. Sehabis upacara, milisi prointegrasi melakukan pawai keliling Kota Dili dipimpin oleh Eurico Guterres. Dalam pawai itu semua milisi menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dari Polda [Timor Timur]. Ketika kami tiba di rumah Manuel Carrascalão dekat Tropical Dili, beberapa milisi menembak pintu dan jendela dan mulai membakar rumah itu.⁹⁹⁵

725. Francisco da Silva Serrão dan Raul dos Santos hendak bersembunyi di dalam kamar mandi rumah Manuel Carrascalão ketika penyerangan itu terjadi tetapi terlanjur dilihat oleh seorang anggota BMP bernama Francisco Afonso do Rosário. Francisco da Silva Serrão mengatakan kepada Komisi:

[S]ehingga kami langsung menyerah...Saat kami mengangkat tangan kami ke atas, tiba-tiba T268 langsung memotong tangan kiri Raul... Kemudian T268 memanggil Raul untuk menghadap kemudian menikam Raul di dada dengan dua pisau hingga tembus ke belakang dan ia tewas seketika. Setelah Brimob menyelamatkan kami...mereka membawa kami ke Polres di Mercado Lama. Saya dan dua teman saya Santiago Canselo dan Filomeno dipisahkan dari pengungsi yang lain. Kami ditahan di Polda di Comoro selama tiga hari, tidak diberi makan dan minum. Pada saat diinterogasi seorang polisi tak dikenal memasukkan batu ke dalam mulut André Serrão...kemudian Letnan Kolonel Paulo mengatakan kepada saya untuk memandang teman saya, katanya: "Lihat teman kamu sudah makan batu, muka macam kalian mau merdeka?"⁹⁹⁶

726. Serangan yang lain terjadi di Meti-Aut (Dili Timur, Dili) pada 17 April. Agapito Ximenes menceritakan bagaimana 15 anggota milisi menghancurkan rumah anggota klandestin Carlito, kemudian mencaci-maki para pemuda di daerah itu. Ketika lima pemuda melarikan diri, para anggota milisi melepaskan tembakan ke arah mereka, dan empat orang terluka yakni Carlos da Silva, João Baptista, Julião da Costa Xavier, dan Agapito Ximenes sendiri.⁹⁹⁷ Amnesty International juga melaporkan bahwa António Barbosa, seorang pegawai negeri dan aktivis kemerdekaan, ditangkap di rumahnya pada hari yang sama oleh para pelaku yang tidak diketahui.⁹⁹⁸

727. Milisi Aitarak kuat di Desa Hera (Dili Timur, Dili). Komisi menerima sejumlah laporan mengenai penangkapan terhadap para pendukung kemerdekaan oleh milisi, TNI, dan polisi di Hera pada 1999.⁹⁹⁹ Dalam satu kejadian Komisi diberi tahu mengenai penangkapan terhadap 17 orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan pada 22 April 1999. T630, mantan kepala desa Hera yang menjadi komandan Aitarak setempat, meminta para dosen, mahasiswa, dan komunitas di Politeknik Hera untuk datang ke sebuah dialog damai dengan milisi Aitarak.

Begitu penduduk desa telah berkumpul, para anggota milisi Aitarak, Brimob, dan milisi BMP mengepung para pemuda dan menangkap mereka yang dianggap sebagai aktivis di Politeknik tersebut. Mereka kemudian dibawa ke rumah kepala desa dan mereka diperkirakan terakhir ditahan di Polda Dili.[†]

Viqueque, April 1999

728. Setelah sebuah upacara di Kodim 1630 Viqueque pada 20 April, wakil panglima PPI, Eurico Guterres, mengumpulkan semua anggota PPI dari kecamatan-kecamatan di Viqueque dan mereka disuruh bersumpah sambil meminum darah anjing (*asu malibuti*). Para anggota PPI dan TNI kemudian mulai mengintimidasi para masyarakat setempat, khususnya orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan. Mereka menangkap dan menyiksa sejumlah pemuda di Desa Ahic (Lacluta), termasuk Domingos Amaral Bosi, Paulo Sarmento, Jovelino Andreas Sarmento, Jerónimo dos Santos, Fransisco Gomes, Cipriano Correia, Fransisco Sarmento, Norberto Soares, Adriano de Jesus, dan Isac Martinho.¹⁰⁰⁰

729. Peristiwa selanjutnya yang terjadi di Subdistrik Lacluta (Viqueque) menggambarkan bagaimana para kepala desa dan pegawai sipil pemerintah lainnya juga menjadi sasaran. Pada 30 April di Lacluta, 14 aparat desa setempat dari Desa Ahic ditangkap setelah mereka mengintervensi sebuah kegiatan yang dilakukan oleh milisi beberapa hari sebelumnya.[‡] Mereka antara lain Kepala Desa Germano Gomes Amaral, Sekretaris Desa José Martins Lopes, lima orang ketua RK, tiga ketua RT, dan seorang katekis gereja, Eugenio Soares. Menurut Eugenio Soares, milisi dan TNI mengumpulkan masyarakat pada malam hari untuk membunuh sejumlah sapi dan mereka disuruh mendengarkan pidato-pidato pro-otonomi. Ke-14 aparat desa bersama-sama memutuskan menyuruh penduduk pulang dan beristirahat ketimbang ikut serta.¹⁰⁰¹ Komandan Koramil Sersan Mayor T598 bersama para anggota milisi Tim Makikit¹⁰⁰² menangkap kelompok tersebut dan membawa mereka ke Koramil Lacluta.[‡] Para korban diinterogasi, dipukuli dengan tongkat dan pipa, ditendang, dan diinjak-injak dengan sepatu, mengakibatkan luka parah sehingga salah seorang dalam kelompok itu, Zacarias da Silva Belo, meninggal.¹⁰⁰³ Para pelakunya adalah Komandan Koramil T598 dan sembilan orang anggota milisi Makikit.

.....
* HRVD pernyataan-pernyataan 3757, 615, dan 6952. Nama-nama dari korban yang diculik adalah Belai, Leopoldino, Quieros, Cesaltino, Amoe, Kobuti, Eurico Gaspar Amaral, Alberto da Silva Costa, António da Costa, Domingos da Silva, Sebastião da Silva, Egidio da Silva, Elvino Cerilo dos Santos, Fernando dos Santos, Helio Tavares Guterres, José Cai, dan Laurentino Sarmento.

† Ke-14 aparat desa yang ditangkap adalah: Germano Gomes Amaral, Kepala Desa Ahic; José Martins Lopes, Sekretaris Desa; Domingos Belo, RK; Luciano Lemos, RT; Acacio Soares Ximenes, RK; Gilberto Paiva, RT; Moises Marques, RT; Mateus Horta, RK; Teofilo Gusmão, RK; Inácio Soares, pegawai pemerintah desa; Mateus Soares; Eugenio Soares, seorang katekis gereja; Pedro da Costa Araújo, RT; dan Zacarias da Silva Belo. [lihat Pernyataan-pernyataan HRVD 0404; 0471; 0469; 9167; 0477; 0475 dan submisi oleh Robinson, hal.189].

‡ Menurut Pernyataan HRVD 0469 dikatakan kepada mereka bahwa mereka akan dibawa ke Koramil, tetapi sebenarnya mereka dibawa ke pos BMP. Pernyataan HRVD 0475 mengatakan sebenarnya mereka dibawa ke kantor KUD (Koperasi Unit Desa).

Molop, Bobonaro, 24 April 1999

730. Operasi juga kadang-kadang dilaksanakan di suatu desa karena informasi intelijen dan isu-isu bahwa desa tersebut terlibat dalam kegiatan klandestin. Jika TNI mendengar tentang desa seperti itu, para prajurit TNI, milisi, atau keduanya terkadang meneror seluruh desa tersebut atau bahkan kecamatan di mana desa itu berada. Karena itu bukan hanya mereka yang dicurigai melakukan kegiatan prokemerdekaan yang menjadi korban intimidasi, penahanan, dan penyiksaan, tetapi seluruh masyarakat juga dibuat menderita. Justino Barreto, kepala kampung Omelai di Desa Molop (Bobonaro, Bobonaro), menggambarkan bagaimana masyarakatnya diintimidasi oleh para anggota dari dua kelompok milisi bersenjata senapan otomatis:

Tanggal 24 April 1999, T684, komandan milisi Halilantar dan anggotanya T685 dan para anggota Dadurus Merah Putih termasuk T686 melakukan operasi di masyarakat Omelai, Desa Molop, Distrik Bobonaro. Mereka datang dari Bobonaro dengan senjata AR-16 dan G-3. Mereka mengepung rumah saya karena dicurigai klandestin, [melakukan] kerjasama dengan [komandan] Falintil Loro Mesak, menyebarkan surat ajakan [apelo] pada masyarakat yang mengandung misi politik melawan pasukan Indonesia untuk merebut kemerdekaan.

Seorang anggota Koramil masuk dalam rumah dan tarik saya keluar dan menjemur saya di di terik matahari satu hari penuh. Mereka bawa pisau untuk bunuh saya...Ia merampas uang [yang dikumpulkan] Rp1.300.000 dan uang pribadi saya Rp1.400.000 dan memaksa masyarakat dansa dengan mereka. Jika menolak, semua penduduk Molop akan dibunuh. Karena takut, saya sebagai kepala kampung memobilisasi sembilan orang muda [lima laki-laki muda dan empat perempuan] untuk dansa dengan milisi sampai pagi. Tanggal 25 April 1999, mereka serahkan saya ke Koramil 01 Bobonaro untuk diinterogasi mengenai apelo yang saya keluarkan. Setelah itu saya dilepas ke pulang rumah.¹⁰⁰⁴

Mei 1999

731. Pada 5 Mei 1999, Kesepakatan 5 Mei antara PBB, Pemerintah Indonesia, dan Portugal yang ditandatangani di New York memberikan tanggung jawab keamanan wilayah Timor-Leste kepada militer dan polisi Indonesia. Penahanan dan penyiksaan terhadap warga Timor-Leste mengalami sedikit penurunan setelah kesepakatan tersebut ditandatangani tetapi, berdasarkan laporan yang diterima Komisi, di banyak distrik penahanan dan penyiksaan berlanjut seperti sebelumnya.

732. Upacara-upacara publik terus diadakan untuk mengutuk opsi merdeka, khususnya pada awal Mei. Pada 1 Mei sebuah upacara besar diadakan di lapangan desa Palapan, di Palapan (Oecussi), di mana 100 anggota CNRT dipaksa memutuskan hubungannya dengan organisasi tersebut dan bersumpah mendukung opsi otonomi.

Bupati Oecussi Filomeno Mesquita da Costa, kepala kepolisian Resort Oecussi Letnan Kolonel (Pol.) Wilmar Marpaung, dan Komandan Kodim Letnan Kolonel Kamiso Miran, beserta orang yang akan menjadi penggantinya pada Agustus, Letnan Kolonel Bambang Sungesti, semuanya menghadiri upacara tersebut.¹⁰⁰⁵

733. Berbagai upacara untuk merekrut paksa para anggota milisi juga diadakan di Subdistrik Atabae dan Lolotoe di Distrik Bobonaro. Keduanya dihadiri oleh komandan Halilintar, T1. Basilio Sousa da Silva mengatakan kepada Komisi bagaimana ia dan teman-temannya Laurentino Martins, Tomás Tavares, Maria Fernandes, Sérgio Soares, dan Agostinho Pereira da Silva dipaksa bergabung dengan milisi Halilintar di Atabae:

*Pada bulan Mei 1999 komandan Halilintar, T1, dan komandan Armui, T689, datang dan memaksa kami untuk masuk kelompok Armui. Pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan dibunuh bila menolak. Karena takut, kami masuk. Namun selama menjadi anggota Armui kami tidak pernah melakukan kejahatan terhadap masyarakat.*¹⁰⁰⁶

Serangan Falintil di Lolotoe, Bobonaro, Mei 1999

734. Pada Mei 1999 sebuah serangan terhadap Koramil di Gole, Desa Deudet (Lolotoe, Bobonaro), mengakibatkan terbunuhnya tiga orang prajurit. Hal ini memicu penumpasan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan Indonesia dan milisi di daerah tersebut. Sehari setelah penyerangan pada 16 Mei, BTT setempat dan anggota milisi Kaer-Metin Merah Putih (KMMP) masuk ke daerah tersebut dan menangkap ratusan orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan dan para pemimpin CNRT.¹⁰⁰⁷ Lolotoe daerah yang berbatasan dengan Timor Barat, dikenal sebagai basis pendukung prokemerdekaan bahkan sebelum serangan tersebut.

735. Menurut masyarakat Desa Opa dan Deudet di Lolotoe, kepala seksi intelijen Koramil dan para anggota milisi tiba dari Maliana dengan 17 truk untuk melaksanakan operasi besar-besaran. Mereka membakar rumah-rumah dan memukuli penduduk. Seorang penduduk bernama Armindo ditusuk di bagian punggung oleh seorang milisi bernama T690 tetapi tidak meninggal. Mayoritas penduduk Gole dipindahkan ke Sekolah Dasar Katolik Deudet di mana mereka diintimidasi terus-menerus sampai UNAMET tiba di Timor-Leste dan mereka dibebaskan. Masyarakat Opa dan Deudet menceritakan bagaimana 22 orang ditahan di Polsek dan lapangan desa dan tidak diberi makanan samasekali, meskipun keluarga mereka mengantarkan makanan kepada mereka secara diam-diam. Mereka diperintahkan menggali dua buah kuburan besar seluas lima meter persegi.¹⁰⁰⁸ Berbagai pernyataan yang

.....
* Para prajurit tersebut, Caetano Vicente, Vitorino, dan Bendito dibunuh. Anggota Koramil yang lain, Gabriel, melarikan diri, demikian juga dua orang anggota milisi KMMP, Jhoni Franca dan Mouzinho (José Cardoso). [Pernyataan-pernyataan HRVD 5612; 7164; dan CAVR, Profil Komunitas Desa Opa dan Daudet, Subdistrik Lolotoe, Distrik Bobonaro, 14 Juli 2003.]

diterima oleh Komisi mengindikasikan bahwa banyak lagi lainnya yang ditangkap dalam operasi ini ditahan di Koramil Lolotoe.¹⁰⁰⁹

736. João dos Santos menceritakan bagaimana ia dipaksa menghadiri sebuah upacara tradisional ketika ditahan oleh Koramil dan para anggota Kaer-Metin Merah Putih di Lolotoe:

Pada bulan Mei 1999 anggota-anggota BTT, Koramil, dan milisi Kaer-Metin Merah Putih dari Lolotoe, dipimpin oleh T691 dan T692, datang dan menangkap saya dan 21 orang klandestin lainnya dan membawa kami ke Kota Lolotoe. Kami dipaksa untuk melakukan sumpah tradisional... Tokoh-tokoh adat dari Lebos dan Lolotoe diundang ke upacara itu. Seekor kambing dan seekor ayam disembelih. Satu botol anggur dicampur dengan air kelapa dan darah kambing dan ayam, kemudian mereka memerintahkan kami 21 orang untuk berbaris di bawah tiang bendera di mana bendera merah putih berkibar. Komandan Halilintar dan PPP, T1, dan pengikut-pengikutnya mulai melakukan sumpah meminum darah, sambil mengatakan bahwa mulai sekarang kami yang bekerja untuk klandestin tidak lagi menjadi bagian dari organisasi itu dan kami tidak lagi "kepala dua." Saya dan teman-teman saya mengikuti saja upacara itu karena takut kalau tidak ikut akan mati, tetapi kami tetap menganggap bahwa hanya ada satu jalan, 'Ukun Raik An' [Merdeka].

737. Orang-orang yang ditahan militer di daerah-daerah lain dipaksa turut serta dalam operasi tersebut. Saturnino Mali Eli menjelaskan bagaimana ia ditangkap di rumahnya di Maliana (Bobonaro) oleh TNI, Babinsa setempat, dan seorang anggota TNI, T694, bersama tiga anggota intelijen militer, Letnan T695, [Kepala Seksi Intelijen di Maliana] T696, dan T697; semuanya membawa senapan AR-16. Mereka membawanya ke kantor Desa Raifun I di kota Maliana, di mana ia dipaksa ikut dalam operasi di Subdistrik Lolotoe (Bobonaro). Operasi ini mungkin operasi yang disebut di atas. Sepulangnya dari Lolotoe, ia ditahan dalam sebuah sel di Kodim Maliana selama empat hari, di mana ia diperiksa dan dipukuli oleh seorang anggota TNI, T698. Kemudian ia dibawa keluar untuk dibunuh, tetapi diselamatkan oleh seorang anggota TNI bernama Domingos.*

738. Sebagai akibat dari operasi Lolotoe, Mário Gonçalves, seorang pemimpin CNRT dari Desa Guda (Lolotoe, Bobonaro), juga ditahan dan disiksa oleh sekelompok besar milisi KMMP serta kepala desanya pada 24 Mei. Gambaran berikut ini diambil dari sebuah dakwaan yang dikeluarkan oleh Unit Kejahatan Berat pada Mei 2001, tentang penganiayaan terhadap Mário Gonçalves oleh sejumlah anggota milisi KMMP:

* Pernyataan HRVD 2535; lihat juga 1868 kejadian ketika Kepala Seksi Intelijen, T695, menginterogasi korban di Kodim 1636 Maliana, sambil menekan kakinya dengan kaki meja dan menyuruh dua orang untuk duduk di atas meja tersebut.

Ketika Mário Gonçalves keluar dari gereja, ia dipukul oleh anggota-anggota milisi KMMP ketika diseret ke lapangan di luar kantor CNRT. Di lapangan itu, Sabino Gouveia Leite [kepala desa], José Cardoso Ferreira alias Mouzinho [wakil komandan KMMP], dan João Franca da Silva alias Jhoni Franca [komandan KMMP] memerintahkan milisi KMMP untuk memukul Mário Gonçalves secara bergiliran. Sekitar 37 orang anggota milisi KMMP memukul Mário Gonçalves. João Franca da Silva alias Jhoni Franca juga menyerang Mário Gonçalves dengan parang, melukai tangan kanannya, dan menikam bahu kirinya.

Sabino Gouveia Leite menyuruh José Cardoso Ferreira alias Mouzinho dan João Franca da Silva alias Jhoni Franco untuk memotong telinga Mário Gonçalves...Potongan telinganya dibuang ke tanah dan Sabino Gouveia Leite dan João Franca da Silva alias Jhoni Franca memaksa Mário Gonçalves memakannya. Mário Gonçalves takut dibunuh dan karena itu melakukan apa yang diperintahkan padanya dengan memakan potongan telinga kanannya.¹⁰¹⁰

Ermera, Mei 1999

739. Kekerasan terus terjadi di Distrik Ermera selama Mei 1999 ketika tentara dan milisi melakukan sejumlah operasi di seluruh distrik ini. Operasi-operasi yang dilaporkan kepada Komisi antara lain:

- Pada 2 Mei militer melakukan sebuah operasi di Desa Lauala (Ermera, Ermera) dan menahan para pemuda prokemerdekaan. José Xavier do Amaral ditangkap oleh para anggota Kodim dan anggota SGI.
- Di Desa Mau Ubo (Hatolia, Ermera) antara 9 dan 11 Mei, BTT setempat melakukan penangkapan massal terhadap para pendukung kemerdekaan atau keluarga mereka.¹⁰¹¹ Menurut Jacinto de Jesus Soares, operasi tersebut dilakukan atas permintaan kepala desa Mau Ubo, T700, yang meminta BTT melaksanakan operasi di desa tersebut setelah Falintil dikatakan mengepung rumahnya pada 8 Mei. Semua penduduk desa yang laki-laki lari ke hutan meninggalkan keluarga mereka. Jacinto de Jesus Soares mengatakan bahwa istrinya, Branca Araújo dos Santos, dan seorang saudaranya, Deolinda Santos, ditahan dan kemudian dipaksa untuk mencari suami mereka.¹⁰¹² Pada 12 Mei Jacinto de Jesus Soares dan saudara laki-lakinya, Gregorio Araújo, melapor ke BTT tersebut. Mereka langsung dipukuli dan ditendang selama tiga jam dan kemudian dipaksa untuk meminta maaf kepada kepala desanya. Sebagai imbalan untuk keamanan keluarganya, mereka harus membayar Rp200.000,00 kepada T700 dan memberi satu kerbau, dua kambing, dan dua karung kopi untuk para anggota BTT.*

* Pernyataan-pernyataan HRVD 6421; 6428. Pernyataan HRVD F9425 juga menceritakan bahwa para korban harus membayar satu karung kopi dan dua ayam kepada seorang pegawai negeri sipil bernama

- Di Haturegas, Desa Fatubessi (Hatolia, Ermera) pada 14 Mei, milisi Darah Merah (juga dikenal sebagai Darah Integrasi) melaksanakan operasi untuk menahan para pendukung kemerdekaan. NN menceritakan bagaimana setidaknya 30 orang penduduk Haturegas dipukuli dengan batang kopi yang hijau oleh milisi. NN dipukuli selama beberapa jam, kemudian dibawa bersama dengan istrinya, ON, dan anak lelakinya yang telah dewasa, PN, semuanya prokemerdekaan, ke Fatubessi oleh T147, seorang anggota Darah Merah. Di sana, ON diperkosa dan PN disiksa sangat berat sehingga tidak lama kemudian ia meninggal akibat luka-lukanya.¹⁰¹³
- Sembilan orang pendukung kemerdekaan ditangkap pada 26 Mei 1999 oleh seorang Babinsa T702 dan enam anggota BTT, termasuk T699. Mereka dibawa ke kantor desa Lauana (Letefoho, Ermera) di mana ia dipukuli dan dihunjam dengan sepucuk senapan, kemudian ditahan selama semalam. Para tahanan termasuk Saturnino de Deus Soares, pemimpin klandestin di daerah tersebut, Domingos Soares, Manuel Soares, Serafin Soares, Paolino de Araújo, Maulino, Jaime, João, dan Pedro. Regina dos Santos, istri dari Saturnino Soares, kemudian diperintahkan oleh istri mantan kepala desa untuk memasak bagi para anggota milisi Darah Merah.¹⁰¹⁴

Perburuan lanjutan terhadap anggota klandestin

740. Penangkapan dan interogasi terhadap para anggota klandestin juga berlanjut pada Mei. Monica Amaral menggambarkan tentang penahanannya di Zumalai (Covalima) selama empat hari. Ia disiksa oleh para anggota milisi perempuan, sebuah fenomena baru yang muncul pada 1999:⁷

Pada tanggal 2 Mei 1999, seorang anggota Mahidi perempuan bernama T704 dan seorang anggota tentara T707, bersama sekitar 10 orang anggota Mahidi menyerang SMP kami di Beco dan menangkap saya...[bersama] Domingas dos Santos, Cecilia da Costa, dan Lucia da Costa. Kemudian kami diangkat dengan sebuah mobil Kijang dan dibawa ke markas Mahidi di Zumalai. Ketika kami tiba di sana, kami diinterogasi. Mereka mengatakan kami menyembunyikan granat, senjata, dan bendera Fretilin, tapi kami mengatakan bahwa kami tidak tahu. Pada tanggal 3 Mei 1999 mereka bawa kami kembali ke sebuah rumah di Beco untuk mencari granat, senjata, dan bendera Fretilin. Karena tidak menemukan apa-apa, T704, T711, dan T712 meninju, menendang kami pada bagian punggung. T704 memukul muka saya

.....
T700 untuk membebaskan suami mereka.

* Lihat sebagai contoh kasus Ana Maria Mouzinho (paragraf 687) yang pelakunya juga T704. Dalam kasus lain, T705, seorang anggota Aitarak, disebut oleh Manuel Soares Lemos sebagai orang yang memukulnya dengan batang besi di pos Aitarak di Kampung Alor, Diri Barat, (Dili) pada 14 September 1999. Masyarakat Desa Ahic (Lacluta, Viqueque) menceritakan kepada Komisi tentang dua perempuan dari Ahic, Hermelinda da Conceição dan Rita Correia, yang dipukuli hingga babak-belur oleh T706, seorang anggota PPI, berakibat luka parah di kepala. [Pernyataan-pernyataan HRVD 6260; 7024; dan CAVR, Profil Komunitas Desa Ahic, Subdistrik Lacluta, Distrik Viqueque, 22 November 2002.]

sampai berdarah. Lalu T713 menyundut mulut saya dengan puntung rokok. Mereka bertiga terus memukuli kami. Setelah selesai memukuli kami, mereka membawa kami ke rumah koordinator Mahidi T602 di Zumalai. Mereka menahan kami di sebuah sel dan mulai menginterogasi kami. Kami tidak diberi makan atau minum.¹⁰¹⁵

741. Di Subdistrik Lequidoe (Aileu), pasukan milisi AHI dan Rajawali melakukan beberapa penangkapan ketika mencari anggota klandestin, anggota CNRT, dokumen klandestin, atau penduduk yang menyediakan makanan untuk Falintil. Penangkapan-penangkapan dilakukan dengan Koramil dan Camat T715 yang kantornya digunakan untuk menahan orang-orang.¹⁰¹⁶ Sabino das Neves mengatakan kepada Komisi:

[Ketua] Rukun Tetangga T716 bersama anggota-anggota AHI mengadakan pemeriksaan keluar-masuk rumah pada Mei 1999 untuk mencari dokumen-dokumen klandestin. Di rumah tante saya, Maria Fátima, di Dusun Fatu Merin, mereka berhasil menemukan sebuah surat apelo [pengumuman] dari Chefe do Estado Maior [Kepala Staf Falintil]. Tante saya mengatakan kepada mereka bahwa “anaknya” Sabino das Neves yang membawa surat itu ke rumah. Saya ada di SMP Liquidoe pada saat itu. Setelah pulang [dari] sekolah, saya dan dua teman lainnya, Domingos Araújo dan João Oliveira, ditanyai oleh T716 dan para anggota AHI. Lalu kami dibawa ke Koramil Liquidoe. Belakangan kami dibawa ke markas Koramil. Kami diinterogasi oleh Camat Liquidoe, T716, dan Komandan Koramil Liquidoe, T710. Mereka menelanjangi kami dan menuduh kami membantu Falintil. Komandan Koramil memerintahkan empat orang anggota Koramil menodongkan senjata di atas kepala kami dan kami diancam akan dibunuh apabila tidak memberikan informasi yang jelas. Setelah diinterogasi selama kurang lebih empat jam, mereka melepaskan kami dan memerintahkan kami untuk menghadap ke Koramil setiap hari. Tetapi, pada hari yang sama kami melarikan diri ke Dili.¹⁰¹⁷

742. Organisasi-organisasi intelijen juga terlibat dalam pengidentifikasian dan penahanan terhadap orang-orang prokemerdekaan. Setelah militer mengetahui bahwa Lucas João menyembunyikan enam anggota Falintil di rumahnya di Lahomea (Maliana, Bobonaro) ia ditangkap pada 11 Mei oleh anggota Dadurus Merah Putih, Kaer Metin Merah Putih, SGI, dan Kodim. Kedua tangan dan kakinya diikat kemudian ia dimasukkan ke dalam karung. Ia kemudian dibawa ke Kodim Maliana dan dipukuli sementara masih berada di dalam karung. Setelah itu ia dimasukkan ke dalam sel gelap dan tidak diberi makan atau minum selama lima hari. Sebelum dibebaskan, ia diancam dengan senjata.¹⁰¹⁸

743. Pada 19 Mei 1999, Vicente Lourdes dan Martinho Da Costa Barreto ditangkap oleh Komandan milisi Ablai T717 di Letefoho (Same, Manufahi). Ia menyerahkan

para tahanan kepada anggota Koramil T434, seorang anggota Kodim yang dipanggil T719, dan seorang pemimpin Ablai bernama T720 yang kemudian membawa para korban ke Kodim 1634 Manufahi. Di Kodim itu, T434, para anggota Kopassus dan staf sipil di Kodim menginterogasi para tahanan. Mereka diperintahkan berdiri rapat ke dinding, tangan diangkat ke atas, dan kemudian ditinju, ditendang, dan dipukuli bagian iganya serta disundut dengan rokok di muka dan sekujur tubuh mereka. Mereka ditahan di Kodim selama 10 hari.¹⁰¹⁹

744. Tomás dos Santos mengatakan kepada Komisi bagaimana ia dan pendukung kemerdekaan yang lainnya ditangkap dan disiksa pada 30 Mei 1999:

Pada pukul 4 pagi, seorang anggota milisi Halilintar, José Zoro, menarik saya dari dalam rumah saya di Abatninin [Rairobo, Atabae, Bobonaro]. Ia memegang saya sangat erat dan membawa saya ke jalan dan segera seorang TNI mengenakan baret hijau membawa saya ke sebuah mobil. Di mobil itu telah ada beberapa teman, yaitu: Ernesto Soares, Baptista Guterres, Hermegildo Tavares, Henriques, João da Culu, Fransisco Martins, Afonso Haletalo, dan Jacinto Barros. Kami dipaksa tertelungkup di mobil itu dan punggung kami ditindih dengan balok sementara Komandan Koramil Atabae menginjak balok itu. Kami dibawa ke Koramil dan ketika kami tiba, kami ditelanjangi dan dipukuli dengan akar beringin...[dan] mereka memukuli wajah saya. Lalu mereka memerintahkan kami berbaring di lantai sementara tangan kami diikat. Pada malam harinya, SGI datang dan membawa kami keluar, mengikat mata kami dengan sapu tangan, dan memukuli kami dengan senjata sampai badan kami memar. Sampai sekarang, saya tidak bisa melakukan suatu pekerjaan berat; pinggang saya terpengaruh, sehingga setiap kali saya bekerja, sakit.¹⁰²⁰

Tanda-tanda pengenal

Pemotongan kuping Mário Gonçalves oleh seorang anggota KMMP di Lolotoe bukanlah satu-satunya kejadian semacam itu yang dilaporkan kepada Komisi. Satu pernyataan mengatakan bahwa tidak hanya pihak berwenang Indonesia yang melakukan pemotongan kuping di Lolotoe. Armando do Rêgo, seorang mantan anggota Falintil, mengatakan kepada Komisi bahwa pada 9 Agustus 1999, ketika ia sedang berjalan untuk mengikuti misa bersama dengan istrinya di Lolotoe, mereka dihadang oleh Falintil dan ia dibawa pergi. Para penangkapnya, anggota Falintil T722 dan T723, memukulinya dengan sebuah papan kayu, menendangnya hingga hidungnya berdarah, dan mengancamnya dengan sebilah pisau. Dia mengatakan bahwa sebuah mobil tiba dan dua orang petugas

polisi bernama Constantino dan Caetano ditarik keluar dan kuping mereka dipotong.¹⁰²¹

Pasukan bersenjata Indonesia juga melakukan tindakan yang sama. Masyarakat Laclo (Atsabe, Ermera) melaporkan bahwa pada Mei, para anggota SGI, TNI dan Tim Pancasila memotong kuping seorang laki-laki bernama Bereleki di Desa Laubano dan kuping Agostinho di Desa Obulo. Keesokan harinya, anggota SGI, para Partisan dan Tim Pancasila memotong kuping Lourenço di Atara.¹⁰²²

Komisi juga menerima berbagai cerita tentang orang-orang yang rambutnya digunduli atau dipotong. Dalam satu kejadian seorang laki-laki digunduli rambutnya berbentuk salib, pada kejadian lain semua orang yang dikenali sebagai pendukung kemerdekaan dibariskan berjajar dan rambut mereka dipotong.¹⁰²³

Manatuto, keterlibatan bupati

745. Bupati Manatuto, T724, juga disebut dalam tiga pernyataan yang diberikan kepada Komisi sebagai orang yang secara pribadi menginterogasi orang dan mengizinkan rumahnya digunakan sebagai pusat penahanan.¹⁰²⁴ Sebagai orang yang sudah mempunyai hubungan lama dengan TNI sejak menjadi seorang komandan Tonsus (Peleton Khusus) pada awal tahun 1970-an (lihat Bagian 4: Rezim pendudukan) dan kemudian menjadi perwira Kopassus kehormatan,¹⁰²⁵ ia mengizinkan rumahnya digunakan sebagai pos Kopassus. Joaquim Soares mengatakan bahwa ia pernah ditahan di rumah T724. Joaquim mengatakan kepada Komisi bahwa pada Mei 1999, ketika ia sedang dalam perjalanan ke sebuah upacara pembukaan CNRT bersama keluarga dan penduduk lainnya, anggota dari milisi Tim Morok, T726, T727, T728, dan T729 menghadang mereka. Mereka diperintahkan pergi ke Kodim Manatuto untuk menerima senjata tetapi justru dibawa ke rumah T724. Mata mereka ditutup dengan kain hitam dan kemudian diinterogasi sendiri-sendiri tentang keberadaan lokasi kantor CNRT. Ketika Joaquim Soares menjawab bahwa ia tidak tahu, kedua kaki dan tangannya diikat, ia kemudian dipukuli dengan kayu, ditendang dan ditinju, serta disundut dengan rokok. Setelah penganiayaan ini ia disekap di salah satu ruangan di dalam rumah T724 selama tujuh hari, terus dalam keadaan terikat.¹⁰²⁶

746. João Hornai Sarmiento menceritakan bahwa pada awal 1999, keenam kepala desa dan camat Soibada dicurigai melakukan kegiatan klandestin sehingga dipanggil menemui bupati Manatuto. Ia menanyai dan menginterogasi mereka mengenai keterlibatan mereka dalam kegiatan klandestin. Setelah interogasi tersebut, João Hornai Sarmiento dan lima orang temannya masing-masing diberi uang Rp25.000 untuk pulang ke Soibada tetapi Camat Soibada, Zaolino, masih ditahan di Manatuto. João Sarmiento mendengar bahwa seorang anggota milisi Mahadomi, T732, menyiksa Zaolino dan akhirnya Zaolino dibunuh.*

* Seorang guru bernama Vicente juga terbunuh pada waktu yang sama. (Pernyataan HRVD 0643.)

Penahanan dan penyiksaan antara Juni – 30 Agustus, hari berlangsungnya Jajak Pendapat

747. Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timor-Leste (United Nations Assistance Mission for East Timor, UNAMET) tiba di Timor-Leste pada 4 Juni 1999. Setelah UNAMET tiba, laporan-laporan penangkapan dan penyiksaan menurun jumlahnya, meskipun rakyat terus diintimidasi dan sebagian diancam akan dibunuh, biasanya untuk memengaruhi mereka agar memilih otonomi pada Jajak Pendapat tersebut. Seorang deponen dari Zumalai mengatakan mengenai periode ini:

Setelah UNAMET datang, mereka membebaskan kami untuk pulang tetapi anggota-anggota milisi [Mahidi] T733, T602 dan T644 mengatakan, “Kalau otonomi kalah kami akan membunuh kalian semua termasuk anak dan istri kalian.”¹⁰²⁷

748. Pada periode ini pendukung prointegrasi terus menekan rakyat untuk mendukung tujuannya, terkadang dengan akibat penahanan terhadap para pendukung kemerdekaan. Berbagai “kunjungan sosialisasi” ke masyarakat oleh pihak berwenang yang seolah-olah berniat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Jajak Pendapat itu, sering digunakan untuk mengintimidasi rakyat agar mendukung otonomi.

749. Pada Juni, di Desa Lebos (Lolotoe, Bobonaro), 20 pemuda ditahan selama sehari semalam di kantor desa pada saat kunjungan sosialisasi oleh kepala intelijen Kodim 1636 dan para anggota BTT setempat serta milisi Dadurus Merah Putih. Mereka diancam dan diperingatkan untuk tidak ikut serta dalam kegiatan klandestin, sebelum dibebaskan.¹⁰²⁸ Masyarakat Saburai (Maliana, Bobonaro) juga mengatakan kepada Komisi bahwa pada Juni Komandan milisi Dadurus Merah Putih di Saburai, T736, mengancam masyarakat dengan mengatakan kepada mereka bahwa siapapun yang memberikan suaranya untuk menolak otonomi pada saat pemungutan suara, akan dipotong tangannya.¹⁰²⁹ Masyarakat Saboria (Aileu Kota, Aileu) mengatakan bahwa para pemimpin milisi, TNI, dan polisi terlibat dalam acara-acara sosialisasi di mana mereka memaksa anggota masyarakat menyetujui opsi otonomi, menghadiri sebuah upacara sumpah darah dan bergabung dengan milisi AHI.¹⁰³⁰

750. Orang-orang mulai melarikan diri dari rumah mereka dan juga bisa ditahan jika tertangkap (lihat Bab 7.3: Kelaparan dan pemindahan paksa). Di Distrik Liquiçá terdapat kasus-kasus di mana orang-orang yang suami, anak, atau anggota keluarganya yang lain telah lari ke hutan atau mereka sendiri menyembunyikan diri di hutan dan anggota keluarga mereka ditangkap.¹⁰³¹ Abilio Lobato de Fatima mengatakan:

Pada tanggal 7 Juni, satu pasukan gabungan milisi BMP, polisi, dan TNI datang ke Fatunesu di Desa Fahilebo untuk menangkap saya karena mereka menerima informasi bahwa saya telah melarikan diri ke hutan. Mereka bawa saya ke pos komando BMP di Desa Fatumasi [Bazartete, Liquiçá] di mana mereka menahan saya selama 40 hari.

Tanggal 23 Juni 1999 milisi BMP datang lagi ke rumah saya dan menangkap istri semua saudara kami yang telah melarikan diri, supaya mereka memberikan keterangan tentang di mana keberadaan suami-suami mereka. Saya memberi uang Rp500.000 kepada T737 supaya istri saudara-saudara kami dibebaskan. Saya tetap ditahan di pos komando dan ketika di sana, saya diharuskan menjaga pos itu selama 24 jam sehari. Saya berusaha memberi uang Rp950.000 kepada T738 dan T739 untuk melindungi saya dari ancaman milisi lain. Ketika hasil referendum diumumkan tanggal 4 September, tanpa mereka ketahui saya melarikan diri ke hutan.¹⁰³²

751. Para juru kampanye prokemerdekaan juga ditahan. Sebagai contoh, pada 26 Juni milisi DMP di Maliana dilaporkan telah menahan lima anggota klandestin—Mateus Barreto, Augusto Marques, Joséfina Marques, Joanico Soares, dan Fernando Vicente—pada saat mereka sedang berkumpul untuk membagikan spanduk CNRT. Mereka didorong-dorong dan kemudian dibawa ke kantor Polisi Resort Bobonaro, tempat mereka ditahan selama sebulan.¹⁰³³

752. Walau dengan kehadiran PBB, militer masih terus melakukan penangkapan sendiri sekali-kali. Seorang Timor mengatakan kepada Komisi bahwa pada akhir Juni di Fatululik (Covalima), ia ditangkap oleh petugas intelijen, T740, dan dibawa ke Koramil Fatululik. Komandan Koramil, T741, menanyainya tentang dokumen-dokumen tertentu dan ia ditahan selama tiga malam.¹⁰³⁴

753. Orang lain yang ditangkap dibebaskan. Pada 8 Juli 1999 Komandan Koramil Lolotoe Letnan Bambang Indra, Kepala Desa Guda Sabino Gouveia Leite, dan Komandan KMMP José Cardoso Ferreira (Mouzinho), bersama-sama menandatangani dokumen yang menyatakan pembebasan enam orang kembali ke desa mereka di Guda. Dokumen itu menyatakan bahwa mereka ditahan untuk “pembinaan” sejak 22 Mei dan sekarang mereka dikembalikan ke desa mereka “dalam keadaan selamat dan sehat”, tetapi mereka mungkin akan dipanggil untuk ditanyai lebih lanjut sewaktu-waktu nantinya.¹⁰³⁵ Surat itu dengan jelas menunjukkan berlanjutnya kerjasama antara militer, milisi, dan pemerintah sipil.

754. Pada Agustus dengan semakin dekatnya Jajak Pendapat, berbagai kampanye teror yang dilakukan oleh milisi terus meningkat. Pada 25 Agustus, lima hari sebelum Jajak Pendapat, dua orang anggota BMP, T742 dan T743, menangkap Armindo da Conceição dan membawanya ke Pos Komando di Fatumasi (Bazartete, Liquiçá). Armindo mengatakan kepada Komisi bahwa ia telah mengalami pemukulan yang parah sehingga ia kehilangan pendengarannya, bagian punggungnya ditendang, kemudian ia diperintahkan menjaga pos BMP di Unahei.¹⁰³⁶

755. Pada 26 Agustus, milisi Aitarak, termasuk T744, T745, T746, dan T747 menyerang enam laki-laki—Calistro, Julio, Sérgio, Fernando, António, dan Tomás—di rumah Calisto di Hudi Laran (Bairro-Pite, Dili Barat). Mereka dipukuli, ditendang, dan disayat di bagian kepala, kemudian dibawa ke sebuah pos Aitarak dan ditahan sebentar sebelum diserahkan kepada SGI untuk diinterogasi.¹⁰³⁷

Penahanan dan penyiksaan setelah Jajak Pendapat

756. Seperti telah dijelaskan dalam bagian-bagian awal Laporan ini, periode segera setelah Jajak Pendapat dipenuhi kekerasan. Ketegangan semakin meningkat setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat pada 4 September yang diikuti oleh merajalelanya perusakan terhadap rumah-rumah dan infrastruktur. Peristiwa penahanan dan penyiksaan meningkat. Jika sebelum pemungutan suara penahanan dan penyiksaan dilakukan untuk mengintimidasi dan memaksa para tahanan agar mendukung integrasi, setelah pemungutan suara alasan terjadinya kejadian-kejadian itu antara lain:

- penghukuman dan balas dendam
- penahanan terhadap korban yang sudah diincar untuk mengeksekusi mereka
- menahan orang untuk mencegah mereka lari ke gunung atau menangkap mereka ketika mereka kembali ke rumahnya untuk mencari makanan
- mengumpulkan kelompok-kelompok penduduk di satu tempat untuk dikirim ke Timor Barat, sebagai upaya untuk menunjukkan ke dunia internasional bahwa sebagian besar orang Timor tidak setuju dengan hasil Jajak Pendapat dan mereka memilih tinggal di Indonesia

757. Setelah memberikan suara pada 30 Agustus, banyak pendukung CNRT dan prokemerdekaan, khususnya para pemimpin gerakan itu, merasa tidak aman di rumah mereka dan lari ke gunung. Terkadang para anggota keluarga yang ditinggalkan menjadi sasaran penahanan dan penganiayaan. Masyarakat Ahic (Lacluta, Viqueque) menggambarkan bagaimana hal ini terjadi di daerahnya. José Andrade dos Santos dan 39 pendukung kemerdekaan lainnya di Dilor (Lacluta, Viqueque), dalam perjalanan untuk memberikan suara, memperhatikan pos-pos milisi berada di titik-titik strategis. Mereka memutuskan bahwa setelah memberi suara, mereka akan lari dan bermalam di Ue-Aiheres (di balik Gunung Manutargele, di Bibileo, Viqueque) untuk menyiapkan tempat-tempat persembunyian bagi masyarakat. Istri dan keluarga mereka tetap berada di Dilor kota. Para pendukung otonomi menjadikan beberapa dari mereka yang tertinggal, termasuk keluarga José Andrade dos Santos, sebagai sasaran ancaman, intimidasi, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat.¹⁰³⁸

758. Pendukung kemerdekaan lainnya ditangkap dan ditahan setelah mereka lari tetapi kembali ke rumah mereka untuk mencari makanan. Contohnya, Abilio Paicheco, yang lari ke gunung setelah Jajak Pendapat, turun ke Mota Ulun, Becora (Dili) dengan dua temannya untuk mencari makanan pada 17 September. Di perjalanan mereka bertemu dengan enam orang anggota milisi Aitarak. Milisi memukuli dan menendang mereka kemudian menembak bagian punggung Abilio. Ia selamat tetapi mengatakan kepada Komisi bahwa peluru itu masih ada di dalam badannya.¹⁰³⁹

759. Seminggu setelah Jajak Pendapat, pada 7 September 1999, Evangelino da Conceição dan temannya Mateus juga turun dari gunung untuk mencari makanan tetapi tertangkap dan mengalami penganiayaan yang kejam. Dalam perjalanan

ke Dare (Dili) seorang anggota TNI bernama T335 dan pasukan Batalion 613 menangkap mereka. Mereka dipukuli oleh orang-orang yang menangkap mereka. Segera setelah penangkapan itu, seorang anggota Batalion 613 menarik pingang Evangelino dan menusuk telinganya dengan bayonet. Selama dua jam, seorang pegawai negeri sipil memukuli kedua korban tersebut dan menendang mereka di dada dan kuping. Mereka kemudian dibawa ke Koramil Laulara di Dare, di sana mereka kembali ditusuk dengan bayonet di bagian punggung dan paha. Evangelino disundut dengan rokok dan dilempar ke dalam air oleh TNI, sementara seorang warga sipil yang bekerja di Koramil, T479, melemparkan batu ke kepalanya sehingga berdarah.¹⁰⁴⁰

760. Pihak militer, polisi, dan kakitangannya juga memburu para anggota Falintil yang turun dari hutan dan gunung-gunung. Karena seseorang yang turun dari hutan terlihat di rumah Amelia do Carmo di Asumaten di Kota Suai (Suai, Covalima), rumahnya diserang pada 4 September oleh para anggota milisi Laksaur, T750, T751, T752, T753, dan T754 dan 40 polisi dari Kontingen Lorosae. Mereka mendapati empat orang laki-laki di dalam rumahnya, meskipun Amelia hanya kenal satu orang. Semuanya dihajar di tempat dan kemudian dibawa pertama ke kantor polisi lalu ke Kodim Covalima. Anak Amelia yang berumur dua tahun trauma dan akhirnya meninggal setelah ibunya diancam dengan sebilah parang dan Komisi diberitahu bahwa ibunya yakin kalau anaknya meninggal karena terkejut oleh serangan tersebut.¹⁰⁴¹

Setelah Jajak Pendapat

761. Setelah Jajak Pendapat tetapi sebelum hasilnya diumumkan pada 4 September, penahanan terhadap para pendukung kemerdekaan dan anggota klandestin berlanjut.

762. Komisi menerima enam pernyataan dari para anggota PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) di Oecussi dan Ataúro (Dili).¹⁰⁴² Para deponen percaya bahwa mereka menjadi sasaran karena afiliasi mereka dengan partai tersebut.¹⁰⁴³ Menurut Gonzalo Abi dari Oecussi, ini karena banyak anggota PDI-P juga merupakan anggota klandestin atau CNRT.¹⁰⁴⁴ Tito da Costa, seorang anggota PDI-P yang juga seorang anggota klandestin, menceritakan kepada Komisi bagaimana ia dipanggil bersama yang lain, yang sebagian juga merupakan anggota PDI-P, untuk menghadap ke kantor komandan Koramil Ataúro setelah Jajak Pendapat:

Setelah Jajak Pendapat pada tanggal 1 September 1999 pukul 9 pagi, Komandan Koramil memanggil saya dan teman-teman yang bernama José, Alfredo, Tomás Alves, Cezar Brandão, Pedro dos Santos, Daniel, José Rambo, dan Apoli untuk menghadap ke Koramil Ataúro. Sampai di kantor Koramil, Danramil menyuruh kami berbaris. Dia memutar tape recorder menyuruh kami berjoget, tetapi karena kami tidak mau, Danramil menyuruh dua orang anakbuahnya, T755 dan T758, untuk memukul kami. Setelah dipukuli, kami disuruh keluar dan memberi hormat kepada bendera selama kurang lebih dua jam. Setelah itu, Danramil memerintahkan pulang ke rumah supaya kami memanggil

teman-teman lain di Makadade. Setelah diperbolehkan kembali ke desa, kami diharuskan wajib lapor ke Koramil selama satu minggu. Setelah hasil Jajak Pendapat diumumkan, Danramil angkat kaki [dari Atauro] dan kami bebas.¹⁰⁴⁵

763. Di Covalima setelah Jajak Pendapat, kekerasan meningkat secara tajam. Para pelaku mencakup tidak hanya anggota milisi Laksaur dan TNI, tetapi juga polisi setempat dan Kontingen Lorosae. Kontingen Lorosae adalah kontingen polisi Indonesia yang ditugaskan ke Timor-Leste khusus untuk menjamin keamanan selama Jajak Pendapat. Para tahanan dibawa ke kantor-kantor polisi di seluruh Covalima. Di Fohoren (Fohoren, Covalima), banyak penduduk sipil yang mengungsi ke Gereja Fohoren Nossa Senhora do Rosário setelah memberikan suara mereka, untuk mengantisipasi kekerasan yang timbul pascapemungutan suara. Polisi menangkap 14 orang pengungsi di sana dan membawa mereka ke kantor polisi Fohoren.¹⁰⁴⁶ Masyarakat Fohoren menceritakan bagaimana mereka dipukuli, ditelanjangi, dan disundut rokok selama di kantor polisi tersebut. Para perempuan diganggu dengan dipegang-pegang payudaranya dan ditanya berapa kali mereka berhubungan seks semalam sebelumnya. Pemimpin milisi Laksaur, T575, datang berkunjung dari Salele untuk menginterogasi sebagian tahanan.¹⁰⁴⁷

764. Kemudian anggota polisi Timor T758 dan T759, serta Komandan Polisi T760 bersama Komandan Kompil milisi Laksaur T761, seorang komandan T762, dan seorang wakil komandan T763 datang ke Gereja Fohoren dan menangkap 16 orang laki-laki tersebut* setelah para informan memberitahu Laksaur bahwa mereka telah memengaruhi anggota keluarga mereka untuk bergabung dengan gerakan klandestin. Basilio Amaral menggambarkan perlakuan mereka:

Kami dibawa ke pos Laksaur di kantor polisi. Sampai di sana mereka menginterogasi kami kemudian mereka pukul kami satu per satu. Waktu itu mereka membuka pakaian kami sampai kami telanjang kemudian meninju, memukul, tendang, memukul dengan senapan sampai muka saya berlumuran darah. Mereka juga memasukkan senapan ke mulut kami dan memukul wajah saya sampai babak belur. Kami disiksa seperti itu selama dua malam penuh.¹⁰⁴⁸

Penghukuman dan balas dendam

765. Setelah hasil Jajak Pendapat diumumkan, militer dan milisi menanggapi dengan kemarahan. Ratusan pendukung kemerdekaan ditahan dan disiksa atau mengalami perlakuan kejam lainnya yang merendahkan martabat dan tidak manusiawi. Banyak korban penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang memberitahu kepada Komisi bahwa motif penahanan terhadap mereka setelah Jajak Pendapat adalah semata

* Basilio Amaral, Fernando Sarmiento, Hipolito Afonso, Daniel de Araújo, Anito Saldanha, Grasiano do Rego, Paulo dos Santos, José Barreto, António Amaral, Julião Cardoso, Gabriel dos Santos, Angelo dos Santos, Constâncio dos Santos, Roberto Gomes, Pedro do Rego, dan Salvador Pereira.

karena milisi dan militer ingin balas dendam karena hasil Jajak Pendapat. Di Distrik Dili, Komisi menerima berbagai pernyataan yang menggambarkan bagaimana orang-orang dibawa ke markas Aitarak di Tropical ke pos-pos Aitarak, ke kantor-kantor polisi dan Koramil di Metinaro dan dipukuli.¹⁰⁴⁹ Sebagaimana pada bulan-bulan awal 1999, penahanan berlangsung sangat singkat—biasanya tidak lebih daripada beberapa hari.

766. Milisi AHI bertindak sendiri dalam menahan dan menginterogasi Domingos da Cruz. Ia menyatakan bahwa ia ditangkap pada 5 September 1999 oleh T764 dan T765, anggota milisi AHI, dan dibawa ke kantor pertanian di mana ia dipukuli, ditendang, dan ditinju. Kemudian ia di bawa ke markas AHI di mana ia diinterogasi oleh Komandan AHI, T766, dan ditampar serta diancam mati oleh T767. Seorang anggota milisi bernama T768 memukulinya sampai pingsan. Fernando, seorang anggota milisi yang lain, kemudian menyelamatkannya.¹⁰⁵⁰

767. Di Balibó (Bobonaro), Agapito da Purificação, seorang pemimpin klandestin dan CNRT, yang telah memberikan uang dan beras kepada Falintil di Sektor 4, menggambarkan bagaimana ia ditangkap bersama teman-temannya, Alexio Gama, Sabino da Purificação, Manuel Caiero, dan Paulo Soares pada 17 September 1999 di Balibó Kota (Balibó, Bobonaro). Anggota TNI, T769, melakukan penangkapan tersebut bersama komandan milisi Firmi Merah Putih, T770, dan anggota-anggota milisi T771 dan T772. Mereka dibawa ke markas Firmi di Balibó untuk diinterogasi. Dalam perjalanan, T772 memukuli kepala Agapito dengan sepucuk senjata rakitan sampai ia tidak sadarkan diri. Mereka diancam akan dibunuh dan ditahan selama tiga hari tanpa makanan, sebelum dibebaskan.¹⁰⁵¹

Kasus-kasus penahanan sebelum evakuasi

768. Bersamaan dengan mundurnya milisi dan militer, mereka juga memindahkan ribuan orang menyeberangi perbatasan. Kebanyakan dari orang-orang yang dipaksa pindah dengan cara ini melaporkan tentang penahanan dalam waktu singkat, terkadang hanya beberapa jam, sebelum mereka mulai dipindahkan.

769. Masyarakat Desa Ahic (Lacluta, Viqueque) menggambarkan penahanan mereka pada hari diumumkannya hasil Jajak Pendapat, 4 September. Para penduduk Dilor yang belum mengungsi dikumpulkan di halaman Koramil oleh para anggota PPI. Mereka dijaga sangat ketat untuk waktu yang singkat sebelum dievakuasi ke Timor Barat.¹⁰⁵²

770. Di Distrik Lautém, dalam minggu-minggu setelah Jajak Pendapat, di tengah situasi kacau, rumah-rumah yang terbakar, dan suara tembakan, beberapa orang yang tidak sempat melarikan diri tertangkap dan dikirim ke Kodim 1629 di Lospalos.¹⁰⁵³ Sebagian segera dikirim ke Timor Barat, sementara yang lainnya lagi tetap ditahan di Kodim selama beberapa hari.

771. Manuel Mendonça dibawa ke Koramil di Metinaro (Dili) pada 6 September oleh anggota Aitarak di mana ia dipaksa untuk menuliskan namanya dan nama-nama keluarganya dalam daftar orang-orang yang akan dikirim ke Atambua, Timor Barat.

Tetapi pada keesokan harinya, Manuel dan tiga anggota keluarga lainnya melarikan diri ke Kotomurin.¹⁰⁵⁴

Penahanan terhadap orang-orang yang akan dieksekusi

772. Komisi juga mendengar tentang orang-orang yang dikenal sebagai pemimpin yang diincar untuk ditangkap dan ditahan agar mereka bisa dieksekusi (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Para pemimpin milisi dan TNI mengidentifikasi orang-orang tertentu untuk ditangkap. Terkadang dibuat daftar untuk membedakan mereka yang akan dikirim ke Timor Barat dan mereka yang akan dihukum mati.*

773. António da Costa Guterres mengatakan kepada Komisi bahwa milisi BMP menangkap José da Costa Guterres di Odomau (Maliana, Bobonaro) pada 5 September dan membawanya ke Kantor Polres Bobonaro di Maliana, di mana ia kemudian dibunuh karena keanggotaannya dalam CNRT.¹⁰⁵⁵

774. Anibal do Régo dan Lito da Costa Amaral memberikan pernyataan menggambarkan penangkapan mereka ketika mereka mencoba melarikan diri ke Timor Barat pada 9 September. Ketika mereka berada di dekat Koramil Suai, Anibal mengatakan bahwa ia ditangkap oleh komandan Koramil dan milisi Laksaur. Komandan Koramil, Letnan T774, dan T775 dari Laksaur memerintahkan ia dan empat orang korban lain—Paulo Ximenes, Cancio, Lito da Costa Amaral, dan Anis Tahu—untuk masuk ke dalam sebuah mobil. Ketika mereka tiba di Audian, Camanasa (Suai), mereka diperintahkan keluar dari mobil itu dan tiga orang dari mereka, Paulo Ximenes, Anis Tahu, dan Cancio, dipilih untuk dibunuh. Mereka segera ditembak, sementara dua orang tahanan lain, Anibal do Régo dan Lito da Costa Amaral, diantar mobil tersebut pulang tetapi di perjalanan mereka ditendang dan diinjak-injak.¹⁰⁵⁶

775. Domingos Araújo, seorang anggota milisi Mahidi, menjelaskan kepada Komisi tentang kejadian pada 12 September 1999 sewaktu ia dan delapan orang milisi menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Komandan Mahidi, T776, di rumah T776 di Cassa (Ainaro, Ainaro). T776 dan saudara laki-lakinya T779 memerintahkan penangkapan terhadap Paulino Maria Bianco karena ia dicurigai merupakan anggota klandestin dan membantu Falintil. Begitu pertemuan itu selesai, para anggota Mahidi menangkap Paulino dan membawanya kepada T776 esok paginya.

* Penyelidik Unit Kejahatan Berat, Dave Savage, mengatakan kepada Komisi: Kami telah memperoleh bukti-bukti dari seluruh wilayah di distrik-distrik Timor-Leste bahwa daftar yang memuat nama-nama para pemimpin kemerdekaan telah disusun sepanjang 1999. Mereka adalah orang-orang yang diburu dan dalam banyak kasus dibunuh. Ini dapat dilihat dalam jumlah para pendukung CNRT dan pro-kemerdekaan yang dikejar, bahkan di Timor Barat (Kupang dan Atambua), ditangkap, ditahan, dan dibunuh. Dalam banyak kasus, mereka yang ditangkap di Timor Barat dipulangkan kembali ke Timor-Leste untuk dibunuh. Belum lagi pembunuhan lain yang terjadi terhadap mereka yang diidentifikasi dan terdaftar, sebagai bagian dari penyerangan-penyerangan besar (pembantaian di Gereja Suai, Polres Maliana, pembunuhan terhadap para imam, pembantaian Passabe) atau bahkan sebagai bagian dari pembunuhan massal membabitnya terhadap siapapun yang tidak berada di bawah kontrol TNI atau milisi (Maliana 3-9 September) atau pembalasan selagi ada kesempatan, karena berbagai macam alasan. (E-mail dari Dave Savage, Arsip CAVR)

Wajah Paulino dibebat dengan plastik, kedua tangan dan kakinya diikat. Kemudian T776 memerintahkan anggota Mahidi T782 dan T783 untuk membawa Paulino ke Sildena Harikain, Cassa (Ainaro, Ainaro) untuk dibunuh.¹⁰⁵⁷

Pembebasan

776. Dalam kebanyakan kasus penahanan yang dilaporkan kepada Komisi dari 1999, para korban dibiarkan pergi dan pulang, terkadang hanya beberapa jam setelah penangkapan. Sebagian besar dibebaskan setelah mendapatkan peringatan dan ancaman serta dianiaya. Ancamannya bersifat langsung dan tidak langsung. Sebagai contoh, diingatkan bahwa jika peringatan mereka tidak diindahkan, mereka dengan mudah dapat menemukan dan menangkap lagi korban tersebut. Seperti disebutkan di atas, sebagian dibebaskan hanya setelah ikut serta dalam suatu upacara sumpah darah dan setelah berjanji menjadi anggota milisi.

Syarat lapor diri

777. Bagi para korban yang ditahan sebelum Jajak Pendapat, banyak yang melaporkan berbagai keharusan atau persyaratan setelah pembebasan mereka selama sehari-hari, berminggu-minggu, dan terkadang bahkan sampai berbulan-bulan.¹⁰⁵⁸ Ini merupakan pola yang sama dengan periode-periode sebelumnya. Hal tersebut memungkinkan pihak berwenang Indonesia untuk memantau gerak-gerik orang-orang yang diduga sebagai pengacau. Terkadang persyaratan lapor diri ini sangat memberatkan dan melibatkan bermacam-macam lembaga. Francisco da Conceição Guterres yang ditangkap karena dicurigai berhubungan dengan Falintil, menggambarkan bagaimana ketika ia dibebaskan dari Kodim dan Polres di Ermera (Ermera) pada 10 April 1999 ia diwajibkan lapor diri kepada lembaga-lembaga berikut selama sembilan hari:

- 08.00 - 10.00 ke Ermera Kodim 1637
- 11.00 - 12.00 ke Polres Ermera
- 13.00 - 14.00 ke Kejaksaan
- 14.00 - 16.00 ke pengadilan.

778. Francisco diadili pada 19 April 1999 dan mendapat hukuman dua bulan penjara.¹⁰⁵⁹

Suap

779. Sejumlah pernyataan menceritakan mengenai bagaimana para tahanan dipaksa membayar polisi, milisi, atau militer untuk bebas. Pemerasan sudah dilakukan dengan cara ini sebelum 1999 dan hal ini semakin biasa terjadi pada 1999.¹⁰⁶⁰ Komisi juga mendengar setidaknya satu kasus di mana pemberi kesaksian menjelaskan bahwa ia harus membayar semacam uang keamanan supaya tidak ditangkap. Dalam hal ini, seluruh masyarakat Atabae (Bobonaro) dipaksa memberikan uang pada akhir April. Cristovão Afonso menceritakan penangkapannya bersama tujuh temannya oleh milisi Armui pada 26 April karena mereka dicurigai telah memberi

makanan kepada Falintil.[†] Ia mengatakan kepada Komisi tentang pemaksaan untuk menyediakan uang dan barang kepada milisi Halilintar pada 27 April:

Komandan Halilintar mengumpulkan semua masyarakat yang ada di aldeia Diruaben dan Bia-Matae untuk mendengarkan perintahnya. Perintahnya adalah mengharuskan masyarakat untuk mengumpulkan uang, ternak, dan beras untuk memberi makan kepada anggota Halilintar yang beroperasi di Desa Hatas. Kami dibebaskan setelah barang-barang terkumpul.¹⁰⁶¹

780. Sering anggota keluarga diberitahu bahwa orang-orang yang mereka cintai tidak akan dibebaskan ,atau lebih buruk lagi akan dibunuh dalam tahanan, jika mereka tidak membayar.¹⁰⁶² Sebagian terpaksa menjual harta bendanya supaya dapat membayar. Marcus Pereira da Costa Freitas dibebaskan dari sebuah pos BMP di Fatumasi (Bazartete, Liquiçá) tetapi masih diganggu dan akhirnya harus membayar agar dapat hidup relatif aman. Dia mengatakan kepada Komisi:

Saya dibawa ke rumah kepala desa T784. Setiap malam saya diawasi oleh milisi BMP. Kemudian T784 bilang bahwa Camat Bazartete Jacinto Gonçalves, wakil camat Laurindo, dan anggota milisi BMP Manuel Rosário membutuhkan uang. Lalu saya menyuruh istri saya mengambil morten [kalung dari batu berharga] milik nenek saya untuk dijual kepada kepala desa T784 dengan harga Rp800.000. Kemudian bapak saya menambahkan uang Rp1.300.000. sehingga jumlah semuanya Rp2.100.000. diberikan kepada kepala desa T784 untuk selanjutnya diberikan kepada T784 untuk diberikan kepada Laurindo, Jacinto, Manuel Rosário, dan orang-orang mereka. Sesudah mereka saya beri uang itu, mereka mulai membaik dengan saya.¹⁰⁶³

Campurtangan pihak lain

781. Komisi telah menerima sejumlah pernyataan dari orang-orang yang dibebaskan karena campurtangan pihak lain. Kunjungan dari seorang pastor terkadang menghasilkan pembebasan seorang tahanan.[†] Para tahanan lain mengatakan bahwa Komite Palang Merah Internasional (ICRC) membantu pembebasan mereka.[‡] Kadang-kadang, seorang anggota keluarga atau teman yang memiliki posisi untuk

.....
* Ketujuh orang temannya adalah Anselmus Nunes, Julio Nunes, Agustino Soares, Marcelino Ximenes, Flabiano Lopes, Pedro dos Santos, dan Augusta. Deponen tersebut mengatakan bahwa semua tahanan selain dirinya dan Julio Nunes meninggal dalam tahanan karena "kondisi badan sakit parah" setelah mengalami penyiksaan.

† Sebagai contoh Augusto da Silva dan seorang korban yang lain dibebaskan dari Kodim Covalima pada Maret 1999 setelah Pastor Hilário bertemu dengan kepala seksi intelijen, Sersan Yus Nampun. (Pernyataan HRVD 5135-2; Lihat juga Pernyataan-pernyataan HRVD 2161-2; 5641; 8445; 5176.)

‡ Sebagai contoh, ICRC disebut sebagai telah membantu beberapa pembebasan dari Kodim Covalima pada Mei 1999 dan Polres Dili pada 27 Januari 1999. (Pernyataan HRVD 7399; 5176.)

campurtangan akan membantu. Sebagai contoh, pada Januari Paulo dos Santos dibawa dari Markas Marinir di Cassa (Ainaro), di mana ia diinterogasi oleh seorang Marinir terkait dengan kegiatan klandestinnnya. Setelah dua hari, pamannya, Agostinho Sarmento, camat Hato Udo (Ainaro), datang dan membebaskannya kemudian membawanya ke Hato Udo dan ia bersembunyi di sana selama sebulan.¹⁰⁶⁴ José Brites ditahan di pos BMP pada April dan disuruh melarikan diri oleh salah seorang anggota milisi, Ventura, karena ia akan dibunuh pada keesokan harinya oleh para anggota milisi yang lain.¹⁰⁶⁵

Melarikan diri

782. Komisi juga menerima sejumlah laporan mengenai para tahanan yang melarikan diri dari tahanan, sering hanya dengan melarikan diri begitu saja.¹⁰⁶⁶ Ini dimungkinkan karena kedaruratan dan tidak cukupnya penjagaan di gedung-gedung yang digunakan sebagai tempat penahanan, seperti telah dibahas di atas. Sejumlah pernyataan mengungkapkan bahwa para tahanan melarikan diri setelah para penangkapnya mengancam mereka dengan ancaman mati.¹⁰⁶⁷

Penyiksaan dan penganiayaan pada 1999

783. Seperti pada periode-periode sebelumnya, para korban penyiksaan dan penganiayaan pada 1999 mengalami pemukulan, peninjauan, penendangan, dan penyundutan dengan rokok. Sebagai contoh, Armindo Soares Salsinha, seorang pemimpin CNRT di Ermera Kota ditangkap pada 30 April oleh para anggota TNI, Rajawali, dan milisi DMP kemudian dibawa ke pos Rajawali di Balai Integrasi. Ia kemudian dipindahkan ke Koramil. Dia menceritakan perlakuan yang dialami kepada Komisi:

Ketika kami tiba di Koramil, T785 [seorang tentara], T789, dan T786 [milisi DMP] menginterogasi saya dengan meletakkan kaki kursi ke kaki saya dan José menggunakan senjata untuk memukul rahang kanan dan kiri saya sampai copot dua buah gigi saya. T786 menendang dada dan menendang dan meninju dahi saya. Seorang tentara BTT memukulkan senapannya ke punggung saya yang berakibat sampai sekarang saya tidak bisa mengangkat barang berat. Saya terus-menerus dipukuli dari tengah malam sampai pagi.¹⁰⁶⁸

784. Terdapat beberapa perbedaan dari periode-periode sebelumnya dalam hal metode penyiksaan dan penganiayaan yang digunakan pada 1999. Sebagai contoh, di satu sisi Komisi hanya menerima sedikit laporan mengenai penggunaan aliran listrik dibanding dengan masa-masa sebelumnya.¹⁰⁶⁹ Di sisi lain, laporan mengenai ancaman akan dibunuh lebih umum terjadi dibanding dengan pada tahun-tahun sebelumnya.

785. Berbagai metode penyiksaan lain yang muncul dalam periode ini mencakup hal-hal berikut.

Penghinaan dan perendahan martabat

786. Banyak kejadian penyiksaan atau penganiayaan terhadap para korban mengandung elemen penghinaan dan perendahan martabat korbannya, baik di dalam pusat penahanan maupun di depan umum. Melakukan penghinaan terhadap korban di depan publik tidak hanya digunakan untuk membujuk agar orang tersebut tidak “melanggar lagi”, tetapi juga untuk memberi pesan yang jelas kepada masyarakat tentang konsekuensi jika menjadi prokemerdekaan.

787. Beberapa tahanan dipermalukan dengan ditelanjangi di depan umum. Carlito Fernandes menggambarkan kejadian pada 13 April 1999, ketika kepala desa Malabe (Atsabe, Ermera) mengumpulkan semua penduduk Malabe di kantor desa dan kemudian memerintahkan Carlito Fernandes untuk membuka seluruh pakaiannya. Carlito dipaksa berdiri di hadapan penduduk desa yang berkumpul sementara para pelaku memukulinya dengan kayu, menendang, dan kemudian mendorongnya ke kubangan lumpur layaknya seekor kerbau. Ia disuruh pulang dalam keadaan telanjang dan malu. Ini terjadi karena kegiatan klandestinnya terbongkar.¹⁰⁷⁰ Domingos da Conceição mengatakan kepada Komisi bahwa para anggota TNI dari Atsabe (Ermera) menangkapnya karena ia merupakan anggota klandestin di Maliubu (Bobonaro, Bobonaro). Mereka memerintahkannya membuka seluruh pakaiannya kemudian menyuruhnya berdiri di atas sarang semut sambil memukulinya dengan popor-popor senapan mereka.¹⁰⁷¹

788. Perlakuan yang merendahkan martabat para tahanan juga terjadi setelah Jajak Pendapat, sebagai hukuman atas hasil Jajak Pendapat itu. José Costude Cardoso mengatakan bahwa ia disuruh membuka seluruh pakaiannya di depan rumahnya di Borohun, Duyung (Metinaro, Dili) oleh anggota Aitarak pada 31 Agustus 1999.¹⁰⁷² Fernando de Araújo Sarmiento (Sekretaris Klandestin Zona I untuk Subdistrik Foheren, Covalima) ditangkap bersama Basilio Amaral yang pernyataannya dikutip di atas. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa pada 1 September, ia dan 13 orang lainnya ditangkap oleh sebuah kelompok gabungan milisi Laksaur, BTT, Kontingen Lorosae, dan Kapolsek Fohoren, T760.* Mereka dibawa ke Polsek Fohoren di mana mereka dipaksa berdiri dengan satu kaki dengan kedua tangan mereka di atas kepala, sementara mereka dipukuli oleh petugas kepolisian T759, T790, T791, dan T792.¹⁰⁷³

Kekerasan publik

789. Kekerasan publik juga menjadi fenomena yang lebih sering terjadi dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya, mungkin untuk menyebarkan rasa takut dalam masyarakat dan karena milisi-milisi bertindak dengan impunitas. Sebagai contoh, pada 30 Agustus, di Manufahi pada hari pemungutan suara, dua orang laki-laki dipotong-potong, kepala mereka dipampang di depan umum untuk meneror masyarakat agar mengungsi ke Timor Barat.¹⁰⁷⁴

* Para korban lain yang dikenal oleh deponen adalah: Basilio Amaral, Hipolito Afonso, Anito Saldanha, Paulo de Jesus, Angelo, António, Julio, Daniel, Graciano do Rego, dan Gabriel.

Pelecehan secara verbal

790. Kata-kata yang menghina mengenai gerakan kemerdekaan dan ancaman akan pembunuhan lebih umum terjadi dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya.¹⁰⁷⁵ Sumpah darah di mana para pesertanya dipaksa—sering di bawah ancaman akan dibunuh—meminum campuran darah binatang dan manusia serta bersumpah setia kepada Indonesia juga merupakan suatu bentuk pelecehan.

Perlakuan kejam dan merendahkan martabat lainnya

791. Banyak korban mengalami berbagai macam perlakuan kejam dan merendahkan martabat selama 1999, termasuk kepalanya dibungkus plastik, ditelantarkan tanpa makan dan minum, atau dipaksa memakan makanan yang tidak biasa, atau dikencingi.

792. Pada 30 April Alexandre dos Reis ditangkap oleh anggota milisi Laksaur T794 dan T795 dan seorang anggota kepolisian bernama T796, di Desa Akar-Laran di Suai Loro (Suai, Covalima) kemudian dibawa ke Kodim Covalima. Dia menceritakan perlakuan yang dia terima kepada Komisi:

Sebelum memukuli saya, mereka memasukkan saya ke satu kamar, kemudian mengikat leher saya dengan kawat, mengikat pinggang, kemudian memborgol tangan...[Mereka] membungkus kepala saya dengan plastik hitam dan memukul saya dengan tangan mereka. Orang yang menyiksa saya adalah seorang tentara T797 dan tiga orang temannya saya tidak tahu. Saya disiksa mulai pukul 10 malam sampai pukul 12 siang. Kemudian plastik dikeluarkan tetapi tangan saya tetap diborgol. Selama tiga hari tiga malam mereka tidak memberi saya makan dan minum. Karena saya kelaparan dan kehausan, saya berbohong mengatakan mau pergi ke kakus. Di dalam kamar mandi saya minum air satu gayung besar penuh.¹⁰⁷⁶

793. Pada saat ditahan dalam sebuah sel di belakang kantor Desa Cassa (Ainaro, Ainaro), Filomeno Soni dan Basilio ditelanjangi, kepala mereka dibungkus plastik selama 30 menit, dan kuku jempol kaki mereka dicabut dengan tang oleh para anggota BTT setempat, Gadapaksi dan Mahidi.¹⁰⁷⁷

794. Pada 13 September Raimundo Madeira ditahan oleh milisi Aitarak dan dibawa ke sebuah pos TNI di Hotel Resende, Dili. Setelah ditutup matanya, dipukuli sampai tidak sadarkan diri, dan diseret sepanjang jalan besar, ia diperintahkan tidur di lantai. Dia kemudian dikencingi dan disundut dengan puntung rokok.¹⁰⁷⁸

795. Setelah memberikan suaranya dalam Jajak Pendapat, Justino do Rego dos Santos mencoba melarikan diri ke bandara Dili. Dia dihadang oleh milisi Aitarak dan dibawa ke pos Aitarak di Comoro. Di samping menerima pukulan bertubi-tubi yang mengakibatkan darah mengalir dari kupingnya, ia dipaksa untuk memakan dan menelan kartu identitas CNRT miliknya.¹⁰⁷⁹

796. Carlos Pereira menuturkan penganiayaan yang tidak lazim ketika ditahan di Polsek di Suai Loro:

Pada tanggal 25 April 1999 pagi hari seorang petugas polisi Indonesia pergi membeli nasi bungkus dan kemudian memaksa saya dan Agustinho untuk memakannya. Dia menghitung dan pada hitungan ke-10 makanan itu harus sudah kami habiskan. Karena kami tidak bisa, polisi itu berdiri menghunjamkan senapan pada dada saya, pada punggung saya, kemudian pada mulut saya sampai bibir saya bengkak dan mengeluarkan darah.¹⁰⁸⁰

Kesimpulan

797. Beberapa kesimpulan dapat diambil dari bukti tentang pola-pola penahanan sewenang-wenang, penganiayaan dan penyiksaan pada 1999:

- Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan digunakan oleh militer atau kakitangan milisinya secara terang-terangan untuk mengintimidasi penduduk dan memaksa rakyat menjadi pendukung integrasi dengan Indonesia.
- Milisi diberi kekuasaan sebebaskan-bebasnya oleh militer untuk menyorot masyarakat melalui pelecehan secara pribadi maupun publik dan penyiksaan terhadap penduduk sipil. Komisi tidak menemukan sebuah contoh pun tentang milisi yang dihukum atau bahkan didekati, karena penganiayaan yang mereka lakukan. Sebaliknya, bukti-bukti menunjukkan bahwa militer sering terlibat dalam penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap para korban.
- Instalasi-instalasi militer digunakan untuk menahan, menginterogasi, dan menyiksa para korban.
- Kelompok-kelompok milisi juga membuat pusat-pusat penahanan darurat yang kondisi penahanannya buruk.
- Periode penahanan singkat, biasanya tidak lebih daripada seminggu, meskipun ada beberapa pengecualian dalam hal ini. Sering seorang tokoh berwenang membantu pembebasan seorang tahanan. Dalam kasus-kasus lain, suap dibayarkan kepada mereka yang menangkap korban.
- Penyiksaan dan penganiayaan dirancang tidak hanya untuk menghukum korban tetapi juga untuk merendahkan dan memperlakukan korban (laki-laki atau perempuan).

Temuan

Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan UDT

Penahanan

798. Komisi menemukan bahwa:

1. Para anggota dan pendukung UDT serta pasukan UDT melaksanakan penahanan yang meluas selama periode aksi bersenjata pada Agustus 1975. Berbagai tindakan ini jelas ditujukan langsung kepada para pemimpin, anggota, dan pendukung Fretilin. Temuan oleh Komisi ini berdasarkan atas sejumlah wawancara dan kesaksian langsung dari ratusan orang yang ditahan oleh UDT atau yang menyaksikan UDT menahan orang-orang, serta profil sejarah yang dibuat oleh sejumlah komunitas.
2. Para anggota UDT dan pasukan UDT menahan para korban di semua distrik di Timor-Leste kecuali Oecussi, tetapi jumlah terbesar ditahan di Ermera, Dili, dan Bobonaro. Sebagian besar penahanan terjadi pada hari pertama gerakan bersenjata UDT, yaitu pada 11 Agustus 1975, tetapi lebih banyak orang yang ditahan dalam sepuluh hari sesudahnya.
3. Berbagai penahanan ini merupakan strategi utama dari aksi UDT. Meskipun demikian, UDT tidak memiliki wewenang hukum untuk menangkap penduduk sipil dan sejumlah penangkapan serta penahanan timbul dari pendukung Fretilin yang menggunakan hak yang sah atas kebebasan opini politik dan kebebasan berasosiasi.
4. Para korban penahanan yang sewenang-wenang ditahan di berbagai tempat yang diubah menjadi penjara, biasanya adalah sejumlah gedung besar di daerah tempat berbagai penangkapan itu dilakukan. Beberapa gedung ini termasuk gudang, sekolah, rumah pribadi, bekas penjara Portugis, barak militer, dan kandang binatang. Sejumlah pusat penahanan juga didirikan, termasuk Palapaço di Dili dan *Descascadeira* di Baucau, di mana para tahanan didatangkan dari berbagai distrik lain.
5. Periode penahanan berlangsung singkat karena gerakan UDT yang dimulai 11 Agustus tidak bertahan lama. Sebagian besar tahanan dibebaskan dalam waktu dua minggu tetapi beberapa orang ditahan lebih daripada satu bulan. Sementara berada di tempat penahanan, para tahanan dipaksa secara berkala untuk melakukan pekerjaan seperti memasak untuk para tahanan lainnya dan membersihkan berbagai pusat penahanan itu, membangun jalan, atau membawa batu-batu dan kayu. UDT membebaskan beberapa tahanan atas persetujuannya sendiri tetapi sebagian besar diabaikan ketika pasukan Fretilin menyerang daerah di mana para tahanan ditahan dan pasukan UDT melarikan diri.
6. Sejumlah korban penahanan sewenang-wenang oleh UDT yang diketahui oleh Komisi sebagian besar adalah lelaki, yang berusia memasuki dinas

militer dan diyakini para pelaku memiliki hubungan dengan Fretilin. Kadang para anggota keluarga dari korban ini, termasuk istri, orangtua, dan anak-anak mereka, juga ditahan dengan sewenang-wenang.

7. Para pelaku penahanan sewenang-wenang sebagian besar adalah para pemimpin UDT tingkat distrik atau orang-orang yang berada di bawah perintah mereka. Para pemimpin ini mengetahui populasi di masing-masing distrik sehingga secara efektif dapat menargetkan para anggota atau pendukung Fretilin.

Penganiayaan dan penyiksaan

8. Para anggota dan pendukung UDT serta sejumlah individu yang dikerahkan oleh pemimpin UDT melakukan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang meluas terhadap tahanan, selama terjadinya Aksi Bersenjata pada Agustus 1975. Dalam beberapa kasus para tahanan disiksa, tetapi hal ini tidak terjadi secara meluas. Berbagai tindakan ini terjadi antara 11 Agustus 1975 dan akhir Agustus di setiap distrik Timor-Leste, kecuali Oecussi, tetapi terpusat di Ermera, Dili, dan Bobonaro.

799. Temuan Komisi ini berdasarkan pada sejumlah wawancara dan kesaksian langsung dari ratusan orang yang dianiaya dan disiksa oleh UDT atau yang menyaksikan UDT menahan orang-orang.

9. Berbagai bentuk kekerasan fisik yang diderita para korban termasuk:
 - Pemukulan berat dengan tangan atau senapan, oleh satu pelaku atau kadang oleh sekelompok pelaku
 - Cambukan
 - Diikat dalam waktu yang lama, kadang lebih daripada satu minggu
 - Berbagai ancaman pembunuhan
 - Korban disayat dengan parang atau pisau cukur
 - Tamparan dan tendangan
 - Satu korban melaporkan disundut dengan rokok yang menyala

10. Para pemimpin UDT menahan para tahanan di sejumlah gedung atau bangunan yang tidak dipersiapkan untuk menahan sekelompok besar manusia untuk waktu lama. Di berbagai tempat ini sanitasi dan ventilasi sangat tidak mencukupi dan sedikit atau bahkan tidak ada samasekali upaya untuk memperbaiki kondisi-kondisi ini oleh para anggota UDT yang bertanggung jawab terhadap pusat-pusat penahanan ini. Banyak pusat penahanan yang terlalu padat. Selain itu, UDT tidak mempersiapkan perbekalan untuk memberi makan ratusan orang yang ditahannya. Para tahanan dari sejumlah pusat penahanan utama UDT melaporkan tidak diizinkan makan; beberapa orang tidak mendapat makanan sampai sembilan hari. Sedikitnya dua orang yang mati karena kelaparan selama penahanan. Keburukan berbagai kondisi ini sama dengan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

11. Pelecehan fisik berupa penganiayaan dan penyiksaan para tahanan tidak dilakukan untuk memperoleh informasi atau memaksa korban. Agaknya, korban menderita tindakan kekerasan yang disebutkan di atas ketika dalam proses penangkapan, perjalanan ke penjara, dan ketika berada di tahanan sebagai hukuman atau sebagai perwujudan dari kekerasan yang tidak terkendali yang dilampiaskan dalam periode ini.
12. Para korban penganiayaan dan penyiksaan oleh UDT sebagian besar adalah tahanan atau orang-orang yang ditangkap. Karena itu mereka sebagian besar adalah laki-laki berusia memasuki dinas militer yang memang atau dicurigai berhubungan dengan Fretilin. Para pemimpin Fretilin diperlakukan dengan kebrutalan tertentu.
13. Penganiayaan dan penyiksaan tidak selalu diperintahkan Komite Politik UDT, tetapi berbagai ketegangan waktu itu, serta hasutan penangkapan yang dilakukan melalui radio, dan hasutan untuk “menghabisi para komunis” oleh anggota Komite Sentral UDT tertentu, menciptakan situasi di mana kekerasan terhadap para tahanan sangat mungkin terjadi. Selain itu, para anggota Komite Sentral UDT sudah mengetahui bahwa para pemimpin UDT, juga anggota dan pasukannya, menganiaya dan dalam beberapa kasus melakukan penyiksaan terhadap para tahanan. Bentuk penyiksaan yang paling ekstrem terjadi di markas besar UDT di Dili dan di basis-basis kuat UDT di Distrik Ermera dan Liquiçá, di mana para pemimpin UDT terlihat di semua tempat ini.
14. Hanya sedikit upaya yang dilakukan kepemimpinan UDT secara kolektif untuk mencegah atau menghentikan berbagai kekerasan terhadap para tahanan ini, bahkan ketika mereka mengetahui apa yang terjadi.

Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan Fretilin

Selama konflik bersenjata internal

Penahanan

800. Komisi menemukan bahwa:

15. Fretilin membalas upaya gerakan bersenjata UDT dengan pemberontakan bersenjata, yang disertai dengan penangkapan dan penahanan yang meluas terhadap para pemimpin, anggota, dan pendukung UDT. Walaupun kejadian ini sebagian didorong oleh keinginan untuk menghentikan kekerasan terhadap anggota Fretilin, hal ini juga didorong oleh pembalasan dendam atas kekerasan yang telah dilakukan oleh para anggota dan pasukan UDT. Penahanan dilakukan di semua distrik Timor-Leste kecuali Oecussi dan Lautém, tetapi angka tertinggi terjadi di Aileu, Manufahi, Ainaro, dan Dili. Lebih daripada seribu orang ditahan di seluruh wilayah tersebut.
16. Fretilin menahan sebagian besar anggota atau pendukung UDT pada minggu pertama pemberontakan bersenjata, yaitu tanggal 20-27 Agustus 1975, setelah

para pemimpin dan anggota UDT meninggalkan wilayah itu dan lari ke Timor Barat (Indonesia). Berbagai kasus penahanan para tahanan anggota UDT yang tidak diketahui, terus berlanjut sampai terjadinya invasi Indonesia. Fretilin juga menahan para pemimpin, anggota, dan pendukung Apodeti yang terlibat dalam gerakan UDT yang dimulai 11 Agustus terus sepanjang Agustus dan September. Pada 4 Oktober Komite Sentral Fretilin memerintahkan penahanan yang meluas terhadap para anggota Apodeti sebagai tanggapan atas desas-desus adanya kudeta Apodeti dan infiltrasi ABRI di perbatasan Timor-Leste, dan Fretilin kemudian menahan pemimpin senior Apodeti beserta para anggota dan pendukung lainnya. Fretilin juga menahan tentara Portugis, termasuk Kepala Polisi Letnan Kolonel Maggiolo Gouveia, karena keterlibatannya dalam Aksi Bersenjata UDT 11 Agustus 1975.

17. Para korban penahanan sewenang-wenang ditahan di tempat yang dijadikan penjara, biasanya berbagai gedung besar di daerah. Beberapa gedung ini sudah pernah digunakan UDT selama gerakan bersenjata. Berbagai gedung ini termasuk gudang, sekolah, bekas penjara Portugis, museum Dili, barak-militer. Pusat penahanan terbesar berada di markas Fretilin di Aissirimou, Distrik Aileu.
18. Sesudah Fretilin menguasai wilayah ini, Fretilin kemudian memusatkan para tahanan dari Ermera dan Manufahi, di Aissirimou, dan pada 7 Desember ketika Indonesia melancarkan invasi besar-besaran, para tahanan dari Dili juga dipindahkan ke Aissirimou. Sampai pada 9 Desember, jumlah yang ditahan hampir mendekati 1.000 orang.
19. Korban penahanan sewenang-wenang yang dilakukan para anggota dan pendukung Fretilin diketahui oleh Komisi, sebagian besar adalah lelaki berusia memasuki dinas militer dan diyakini oleh pelaku sebagai yang memiliki hubungan dengan UDT atau Apodeti. Para pemimpin partai politik KOTA dan Trabalhista juga ditahan. Kadang anggota keluarga para korban ini juga ditahan dengan sewenang-wenang.
20. Pelaku penahanan sewenang-wenang sebagian besar adalah para komandan Fretilin tingkat distrik atau orang-orang yang berada di bawah perintah mereka. Para komandan ini mengetahui populasi di berbagai distrik sehingga dapat secara efektif menargetkan para anggota dan pendukung UDT dan Apodeti.
21. Setelah akhir konflik bersenjata internal, Fretilin melakukan sejumlah upaya untuk memproses para tahanan. Fretilin membentuk sebuah Komisi Investigasi (*Comissão de Inquérito*) untuk menentukan tingkat keterlibatan para tahanan dalam aksi bersenjata UDT 11 Agustus 1975. Proses investigasi ini melibatkan rakyat yang memberikan kesaksian. Proses investigasi ini beroperasi di tingkat distrik tetapi dalam situasi konflik ini, proses ini tidak lebih baik daripada peradilan massa. Tersangka tidak dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan bersalah oleh rakyat dan tidak berhak menjawab. Bentuk hukuman yang ditentukan rakyat sering kejam dan tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan.

22. Para korban ditahan di penahanan sampai lima bulan, hingga kedatangan pasukan Indonesia mengakibatkan para tahanan tidak dapat dipertahankan dan merekapun ditelantarkan, dibebaskan, atau dalam beberapa kasus dibunuh.
23. Para tahanan sering dipaksa melakukan pekerjaan seperti memasak untuk para tahanan lainnya dan membersihkan berbagai pusat penahanan, membangun jalan, serta membawa batu-batu dan kayu. Di antara para tahanan, ada juga yang direkrut ke dalam pasukan Fretilin/Falintil setelah invasi besar-besaran Indonesia. Agar dapat memberikan makan para tahanan, kamp-kamp kerja dibentuk di mana para tahanan dipaksa untuk bekerja di sawah dan perkebunan kopi.
24. Fretilin mempertahankan tahananannya yang berada di Dili dan Aileu setelah invasi Indonesia karena takut mereka akan jatuh ke tangan militer Indonesia. Fretilin menjauhkan para tahanan dari pasukan Indonesia, pertama-tama membawa mereka yang ditahan di Dili ke Aileu, kemudian memindahkan semua tahanan dari Aileu melalui Maubisse ke Kota Same dan akhirnya ke Holarua di Subdistrik Same, Distrik Manufahi. Sebagian tahanan UDT dibawa ke Ainaro. Di Same, para tahanan UDT dibebaskan dan para tahanan Apodeti yang masih ada dibebaskan secara bersyarat (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, yang berhubungan dengan pembunuhan para tahanan).

Penyiksaan dan penganiayaan

25. Para anggota dan pendukung Fretilin serta sejumlah pasukan Fretilin melakukan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang meluas terhadap para tahanan selama masa konflik bersenjata internal pada 1975. Dalam beberapa kasus, kekejaman perlakuan yang diderita para tahanan mendekati penyiksaan dan sejumlah orang mati akibat kekerasan yang mereka derita. Perlakuan keji ini terjadi dalam situasi kekerasan yang tak terkendali dan dalam semangat pembalasan dendam atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh UDT. Para anggota Apodeti juga terjebak dalam kekerasan itu dan menderita penganiayaan serta penyiksaan, terutama ketika intensitas serangan Indonesia meningkat.
26. Kebrutalan yang dilakukan anggota Fretilin terhadap para tahanan atau apa yang diperbolehkan Fretilin untuk diperlakukan terhadap para tahanan, dapat dilihat dari daftar sebagian perlakuan yang terjadi sebagai berikut:
 - Pemukulan berat dengan tangan atau dengan alat termasuk senapan, batang besi, tongkat kayu, bambu, rotan, kawat rem mobil, helm, alat tumbuk, paku, serta kawat berduri. Beberapa tahanan dipukuli hingga mati atau sampai mereka pingsan, buta, atau tuli.
 - Para tahanan diperintahkan saling memukuli, termasuk tahanan yang mempunyai hubungan keluarga
 - Tusukan

- Cambukan
- Mengikat tahanan sebelum memukuli mereka, agar mereka tidak bisa membela diri
- Menyeret tahanan di tanah sampai mereka terluka dan berdarah
- Menelanjangi para tahanan dan memaksa mereka tidur di tanah yang kasar

801. Sejumlah tindakan ini terjadi mulai 20 Agustus 1975 di semua distrik Timor-Leste kecuali Oecussi tetapi terpusat di Ermera, Dili, Baucau, Manufahi, dan Aileu.

27. Perlakuan terhadap para tahanan di pusat-pusat penahanan bermacam-macam, tetapi hanya di Comarca dan di Museum Dili yang kekerasan terhadap tahananannya tidak dilaporkan. Di berbagai pusat penahanan lainnya, para penjaga penjara sering memukuli para tahanan dan setidaknya tidaknya di sebuah penjara Fretilin, seorang penjaga khusus ditunjuk untuk bertugas menyiksa para tahanan.
28. Beberapa tahanan diinterogasi oleh Fretilin dan dalam sebagian besar kasus, kekerasan bukan untuk alasan apapun, selain untuk menghukum tahanan atau sebuah perwujudan dari situasi umum konflik dan kekerasan.
29. Seperti apa yang telah dilakukan UDT sebelumnya, para komandan dan anggota Fretilin menggunakan sejumlah gedung atau bangunan yang tidak dipersiapkan untuk menahan sekelompok besar orang dalam waktu yang lama. Kondisi sanitasi dan ventilasi sangat menyedihkan dan hanya sedikit bahkan tidak ada samasekali upaya untuk memperbaiki berbagai kondisi ini oleh para anggota Fretilin yang bertanggung jawab terhadap berbagai pusat penahanan itu. Pusat-pusat penahanan ini sering terlalu padat, terutama pusat-pusat penahanan yang berada di Aileu. Kondisi ini sangat memilukan, sama dengan perlakuan kejam, tidak manusiawi, serta menurunkan martabat manusia.
30. Porsi makanan yang diterima para tahanan Fretilin bermacam-macam. Di Baucau dan di Comarca Dili, para tahanan dilaporkan menerima makanan tiga kali sehari dari Agustus sampai Oktober. Di berbagai pusat penahanan lainnya para tahanan dilaporkan menerima tidak cukup makanan. Sejak November, ketika serangan Indonesia di sepanjang perbatasan berlanjut, sejumlah pusat penahanan mengalami kekurangan makanan yang cukup parah. Kepemimpinan Fretilin sadar akan keadaan kekurangan makanan ini dan mendirikan berbagai kamp kerja di Aileu, tetapi ini pun tidak berhasil untuk memberi makan para tahanan, sebagian besar karena serangan militer Indonesia. Fretilin tidak membebaskan para tahanan walaupun menyadari tidak dapat lagi memberi mereka makanan. Hal ini sama dengan perlakuan keji, tidak manusiawi, dan menurunkan martabat manusia.
31. Walaupun kekerasan terjadi dalam konteks konflik bersenjata, jelas bahwa para anggota senior Komite Sentral Fretilin mengetahui kekerasan yang terjadi terhadap para tahanan. Perlakuan yang paling brutal terhadap para

tahanan terjadi di markas Fretilin di Taibesi dan di Aissirimou, Aileu. Perlakuan terhadap para tahanan berbeda-beda antardistrik, begitu pula tingkat tanggung jawab penganiayaan dan penyiksaan terhadap tahanan. Di Baucau, para tahanan mengatakan bahwa mereka dipukuli secara berkala tetapi hanya oleh para penjaga saat atasan mereka sudah pergi. Namun, di Manufahi dan Aileu, para pemimpin Fretilin hadir pada saat penyiksaan para pemimpin UDT dan tidak hanya memperbolehkan tetapi juga menghasut komunitas untuk menyerang para anggota UDT. Beberapa anggota Komite Sentral Fretilin mengemukakan apa yang mereka ketahui mengenai kekerasan terhadap para tahanan, tetapi mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengendalikannya.

32. Tidak cukup upaya dilakukan kepemimpinan Fretilin untuk mencegah terjadinya kekerasan atau menghentikan kekerasan terhadap para tahanan, bahkan sesudah mereka mengetahui apa yang terjadi.

1976-1979

802. Komisi menemukan bahwa:

Penahanan

33. Sesudah invasi Indonesia, Fretilin tetap menahan orang-orang di wilayah yang berada di “zona-zona bebas” (*zonas libertadas*) yang dikuasai Fretilin, sampai pada hancurnya basis-basis Resistansi. Komite Sentral Fretilin secara rutin menggunakan penahanan untuk menegakkan disiplin dan kontrol serta untuk menyelesaikan perbedaan politik.
34. Karena berbagai penahanan adalah unsur yang diakui dalam administrasi *zonas libertadas*, ada anggota Komite Sentral Fretilin yang melakukan penangkapan langsung atau memerintahkan untuk melakukan penangkapan. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap para tahanan yang dicurigai adalah sesuai dengan prosedur dalam wewenang para komandan Fretilin dan interogasi disaksikan oleh komisaris politik. Karena itu, penahanan sewenang-wenang jelas dibiarkan oleh Komite Sentral.
35. Fretilin menahan orang-orang atas sejumlah pelanggaran terhadap aturan-aturan Fretilin yang disusun oleh Komite Sentral; termasuk dalam hal ini adalah menjadi pengkhianat terhadap posisi politik Fretilin, bangsa, atau partai, atau yang melanggar tata tertib. Karena tidak adanya panduan, berbagai aturan ini diterapkan secara tidak konsisten sehingga dalam praktik suatu tindakan atau dugaan tindakan yang tidak disetujui oleh Komite Sentral dapat dilaporkan sebagai pengkhianatan atau pelanggaran peraturan Fretilin.
36. Para korban penahanan adalah mereka yang berada di bawah pengawasan Fretilin termasuk para anggota Fretilin dan Falintil serta penduduk sipil biasa. Orang-orang yang dianggap sebagai “reaksioner” dan “pengkhianat”

menjadi target. Sering orang yang berhubungan dengan pemimpin Fretilin/Falintil tertentu, ditahan.

37. Fretilin melakukan sejumlah upaya untuk memproses para tahanan melalui praktik-praktik pengadilan rakyat (*Justicia Popular*) untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap para tahanan, tetapi hukuman pemenjaraan sebagai hasil dari proses-proses ini terjadi sewenang-wenang. Tidak ada kesempatan bagi tersangka untuk membela diri atau untuk naik banding atas keputusan atau hukuman itu. Selain itu, banyak orang yang ditahan selama berbulan-bulan sebelum “diadili” atau tidak diberitahu tentang tuduhan-tuduhan terhadap mereka, atau bahkan tidak pernah diadili samasekali.
38. Para tahanan ditahan di berbagai bangunan yang tidak memadai seperti “kandang babi”;^{*} kandang ayam, gubuk bambu, atau lubang-lubang di tanah. Pada awalnya berbagai tempat ini digunakan untuk menahan orang-orang, tetapi pada akhir 1977 banyak kamp rehabilitasi nasional (*Campo de Rehabilitação Nacional*, atau *Renal*) juga membangun tempat-tempat tahanan seperti di atas. Renal lainnya didirikan sesuai keperluan. Kondisi Renal hampir sama dengan penjara di mana para tahanan disekap, kecuali Renal-Renal ini didirikan dengan prinsip orang-orang yang melakukan kesalahan dapat “direhabilitasi”. Para tahanan menerima pendidikan politik dan kadang pelajaran baca tulis, juga dipekerjakan di ladang-ladang komunal dalam sebuah etos kesetaraan yang diimpikan.
39. Hukuman pemenjaraan secara teoretis tidak menentu dan masa penahanan semacam ini berlangsung hingga *base de apoio* dihancurkan. Kendati pun demikian pada saat itu Komite Sentral membebaskan hanya beberapa tahanan menurut persetujuannya sendiri. Selain itu ada juga para tahanan yang melarikan diri ketika pasukan Indonesia tiba di daerah itu atau dibebaskan Fretilin ketika penahanan selanjutnya sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Penyiksaan dan penganiayaan

40. Para anggota dan pendukung Fretilin serta sejumlah pasukan Fretilin melakukan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat secara meluas dan juga penyiksaan terhadap para tahanan di berbagai pusat penahanan dan Renal antara 1976 dan 1978. Penyiksaan dan penganiayaan dilakukan dengan lebih kejam daripada dalam periode konflik internal, saat mereka menjadi bagian rutin dari praktik peradilan yang diatur Fretilin. Penyiksaan dan penganiayaan tidak hanya digunakan untuk mengendalikan para tahanan, tetapi juga digunakan selama interogasi dan untuk menghukum lawan-lawan politik. Banyak orang yang tewas dalam penahanan.

.....
^{*} ‘Kandang babi’ di sini bukanlah kandang babi dalam pengertian yang sebenarnya tetapi bangunan baru yang kadang dibuat dengan bentuk dan ukuran menyerupai kandang babi. Nama ‘kandang babi’ digunakan merujuk kepada kenyataan bahwa para tahanan makan, minum, dan buang air di tempat itu juga, sebagaimana layaknya babi di kandang.

41. Berbagai metode penyiksaan dan penganiayaan yang biasa dialami korban adalah:

- Pemukulan berat dengan tangan, senapan, dahan berduri, atau potongan kayu lainnya
- Cambukan
- Membakar tubuh korban dengan batang besi yang dipanaskan, rokok yang menyala, atau potongan kayu yang menyala
- Mengikatkan korban ke pohon atau tiang dan membiarkan mereka di bawah sinar matahari untuk waktu yang lama
- Mengikat korban sedemikian rupa sehingga gerakan mereka sangat terbatas dan mereka tidak dapat makan serta melepaskan diri
- Mengencingi korban
- Menempatkan korban dalam sebuah lubang yang dipenuhi semut
- Ancaman pembunuhan atas korban
- Tendangan dengan menggunakan sepatu bot

42. Para anggota Komite Sentral sering terlibat langsung dalam penyiksaan terhadap para tahanan atau menyaksikan dan tidak melakukan apa-apa untuk menghentikannya.

43. Di beberapa tempat para tahanan ditahan dalam kondisi yang berdesak-desakan dengan ventilasi yang buruk dan di semua tempat, kondisi sanitasi buruk. Beberapa tahanan dibiarkan membuang air kecil dan air besar di tempat mereka duduk. Dalam banyak kasus, kondisi penahanan dipenuhi oleh perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

44. Fretilin sering menghalangi tahanan mendapatkan makanan atau tidak mampu menyediakan cukup makanan. Para tahanan banyak yang mati akibat kelaparan atau karena sakit yang diakibatkan oleh kelaparan. Para tahanan yang sedang sakit pun masih dipaksa bekerja. Hal ini sama dengan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat manusia. Perlakuan ini sebagian dapat dijelaskan oleh sulitnya situasi pada saat itu: saat para pasukan Indonesia maju, mereka membakar kebun-kebun persediaan makanan Fretilin dan memaksa Fretilin bergerak. Namun Fretilin tidak membebaskan tahanan walaupun mereka sadar bahwa mereka tidak dapat memberi makan kepada para tahanan. Selain itu dalam banyak kasus Fretilin dengan sengaja menahan makanan untuk para tahanan untuk menghukum mereka, termasuk menahan makanan yang dibawa oleh keluarga tahanan untuk mereka.

Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan oleh militer, polisi, dan para “agen” Indonesia

Penangkapan dan penahanan

803. Komisi menemukan bahwa:

45. Para anggota pasukan keamanan Indonesia dan para pendukungnya melakukan, mendorong, dan membiarkan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang meluas dan sistematis selama periode pendudukan Indonesia terhadap Timor-Leste.

804. Komisi mendasarkan temuannya pada kurang lebih 150 wawancara dan ribuan pernyataan, termasuk kesaksian langsung mengenai penahanan sewenang-wenang dan bukti yang menguatkan dalam pernyataan-pernyataan sejumlah saksi, serta berbagai dokumen lainnya termasuk berbagai dokumen militer Indonesia yang dimiliki oleh Komisi.

46. Selama masa pendudukan besar kemungkinan terdapat puluhan ribu orang Timor yang ditahan. Komisi mendasarkan temuannya pada fakta bahwa proses pengambilan pernyataan dari Komisi mengidentifikasi 18.518 korban penahanan sewenang-wenang oleh militer Indonesia dan para pendukungnya di dalam lebih daripada 20.895 peristiwa penahanan. Karena proses pengambilan pernyataan hanya mengambil sejumlah pernyataan dari kira-kira 1% dari populasi, maka jumlah sebenarnya orang-orang yang ditahan dipastikan jauh lebih banyak.

47. Penahanan-penahanan meningkat selama dan setelah berbagai operasi militer. Jumlah orang yang ditahan memuncak pada 1979 tetapi antara 1975 dan 1983 angka ini tetap tinggi, yaitu pada periode berbagai operasi besar militer. Penahanan memuncak lagi pada 1999 selama persiapan Jajak Pendapat dan setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat.

48. Penguasa Indonesia menangkap orang di setiap distrik di Timor-Leste walaupun angka penahanan tertinggi adalah di Dili, di mana terdapat sejumlah penjara negara yang terbesar dan sejumlah pusat interogasi utama, diikuti oleh berbagai distrik timur di Timor-Leste. Hanya sedikit orang yang ditangkap di Oecussi setelah periode awal invasi sampai pada kekerasan milisi pada 1999. Data Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa militer dan polisi Indonesia serta para pendukung mereka lebih banyak melakukan penahanan sewenang-wenang di daerah-daerah di mana gerakan Resistansi dianggap kuat dan juga di Dili di mana terdapat pusat-pusat administrasi dan logistik mereka.

49. Sebagian besar korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang adalah lelaki dalam usia dinas militer (20-39 tahun) yang memang atau dicurigai berhubungan dengan berbagai kelompok yang menentang pendudukan termasuk Fretilin/Falintil, sejumlah jaringan klandestin, atau kelompok prokemerdekaan lainnya. Begitu pula pasukan keamanan

Indonesia dan para pendukungnya juga menargetkan para anggota keluarga, termasuk istri, orangtua, serta anak dari orang-orang yang dicurigai sebagai anggota Resistansi bersenjata, jaringan klandestin, atau kelompok prokemerdekaan lain. Penangkapan ini dilakukan atas nama keamanan nasional dan pembersihan Timor-Leste dari anggota-anggota 'Gerombolan Pengacau Keamanan' (GPK).

50. Tujuh puluh persen penahanan yang dilaporkan dilakukan langsung para pasukan keamanan Indonesia. Pasukan ini termasuk anggota Batalion tempur, anggota komando daerah (provinsial), distrik dan subdistrik, beserta batalion-batalion yang berhubungan dan cabang-cabang intelijen mereka, anggota Satuan Gabungan Intelijen (SGI) atau Pasukan Khusus Indonesia (Kopassandha/Kopassus), dan anggota kepolisian di tingkat subdistrik, distrik, dan provinsi. Awalnya, militer melakukan sebagian besar penangkapan. Hal ini berubah selama periode pendudukan dan sejak pertengahan 1990-an tanggung jawab atas sebagian besar penangkapan berpindah ke polisi.
51. Kopassandha/Kopassus bergerak aktif dari tingkat pusat hingga ke desa sepanjang pendudukan. Peran langsung Kopassandha/Kopassus dalam melakukan penahanan para penduduk memuncak antara 1983 dan 1986 setelah terjadinya pemberontakan di distrik-distrik bagian timur. Kopassandha/Kopassus kemudian mulai membentuk, melatih, serta mempersenjatai milisi lokal.
52. Kategori pelaku terbesar kedua adalah orang Timor yang berkolaborasi dengan militer Indonesia. Para kolaborator ini (termasuk pertahanan sipil [Hansip], pegawai negeri, paramiliter, dan milisi) terlibat langsung dalam 34% penahanan tetapi dalam banyak kasus penangkapan ini dilakukan atas perintah militer atau dilaksanakan bersama militer Indonesia. Beberapa kelompok paramiliter dan milisi dibentuk secara spesifik oleh militer Indonesia untuk menakut-nakuti populasi lokal di daerah-daerah di mana perlawanan sangat kuat, termasuk menahan dan menyiksa orang-orang yang dicurigai sebagai anggota klandestin. Para kolaborator juga berperan penting dalam memberikan informasi intelijen kepada militer.
53. Selama invasi dan pendudukan Indonesia, penangkapan dan penahanan digunakan untuk menghancurkan Resistansi di Timor-Leste dengan cara sebagai berikut:
 - Dengan menahan anggota-anggota Resistansi, mereka dicegah untuk melanjutkan aktivitas mereka atau berkomunikasi dengan para rekan mereka.
 - Intelijen dan personel militer lainnya menggunakan interogasi terhadap para tahanan untuk memperoleh informasi mengenai struktur dan strategi Resistansi atau mengenai keberadaan para anggota Resistansi tertentu.
 - Penahanan sewenang-wenang dan berbagai kekerasan lainnya yang terjadi selama periode penahanan, menghukum orang-orang yang

memang atau dicurigai sebagai anggota kelompok Resistansi. Dengan demikian, yang lainnya diperingatkan tentang akibat yang akan mereka tanggung jika mengikuti orang-orang ini.

- Menahan para anggota keluarga dan rekan orang yang dicurigai sebagai anggota Resistansi dapat memberikan informasi intelijen kepada pasukan keamanan mengenai para anggota yang dicurigai tersebut, dan juga untuk dipakai menghukum anggota keluarga atau rekannya sebagai pengganti anggota Resistansi yang dicurigai tersebut.
- Apabila kelompok-kelompok besar ditangkap, para anggota Fretilin dan Falintil biasanya dipisahkan dari penduduk sipil biasa didasarkan pada informasi intelijen dan kemudian ditahan.

54. Praktik kelembagaan pasukan keamanan Indonesia adalah menangkap dengan sewenang-wenang orang-orang yang dicurigai tanpa penghargaan samasekali terhadap proses yang seharusnya, terutama pada tahun-tahun awal pendudukan. Orang-orang yang ditangkap tidak dibacakan hak-haknya atau pun diberitahukan tuduhan terhadap mereka. Penggunaan kekuatan yang berlebihan digunakan secara rutin dalam penangkapan para tersangka.
55. Temuan ini didasarkan pada bukti pendukung yang kuat dan luas, yang menunjukkan bahwa praktik penangkapan tanpa surat perintah dan penggunaan kekuatan yang berlebihan dilakukan oleh jajaran luas unit militer, polisi, dan Kopassandha/Kopassus di semua distrik Timor-Leste pada setiap tahun periode pendudukan.
56. Sepanjang pendudukan, terutama antara 1975 dan 1984, pihak berwenang Indonesia melakukan penangkapan massal rutin terhadap berbagai kelompok yang terdiri atas 98 orang atau lebih. Penangkapan ini dilakukan sepanjang berbagai operasi-operasi militer berskala besar, sebagai balasan terhadap serangan-serangan pihak Resistansi atau setelah informasi intelijen mengidentifikasi satu desa tertentu yang mendukung gerakan klandestin atau menyembunyikan para anggota Falintil. Kadang penangkapan besar-besaran dilaksanakan sebagai hukuman kolektif atas sejumlah tindakan yang dilakukan beberapa orang.
57. Sejak 1985 orang lebih sering ditahan secara individual daripada dalam berbagai kelompok besar, menunjukkan bahwa penahanan-penahanan dilakukan secara lebih bertarget daripada sebelumnya. Para pasukan keamanan Indonesia menggunakan para pendukung orang Timor sebagai intelijen untuk mengidentifikasi para anggota Fretilin, Falintil, jaringan klandestin, atau keluarga mereka dan menargetkan orang-orang ini untuk ditangkap.
58. Kadang intelijen digunakan untuk menyusun 'daftar hitam' yang berisi nama para tersangka yang kemudian digunakan untuk penangkapan. Orang-orang yang berada dalam daftar ini ditangkap berkali-kali. Mereka sering dikumpulkan untuk mengantisipasi sejumlah kejadian perlawanan seperti demonstrasi.

59. Dalam sebagian besar kasus, orang-orang ditangkap ketika berada di rumah mereka atau di tempat kerja atau dipanggil ke kantor polisi atau pos militer oleh kakitangan orang Timor dan kemudian ditahan. Yang lainnya ditahan pada saat sejumlah operasi militer. Hanya sedikit yang “tertangkap basah” dalam kegiatan Resistansi, seperti ketika menghadiri demonstrasi.
60. Orang Timor yang tinggal di Indonesia, terutama pelajar, juga menjadi sasaran penangkapan dan penahanan, khususnya pada 1990-an, ketika banyak orang yang ditahan karena berpartisipasi dalam demonstrasi atau kegiatan klandestin lain.

Kondisi-kondisi penahanan

805. Komisi menemukan bahwa:

61. Para anggota pasukan keamanan Indonesia dan para pembantunya melakukan, mendorong, dan menyetujui penahanan sistematis dan meluas terhadap orang Timor dalam kondisi di bawah standar minimum internasional tentang perlakuan terhadap tahanan. Ratusan orang meninggal dalam tahanan, karena penganiayaan yang disengaja atau karena tidak dipedulikan, kelaparan, dan penyakit. Dari 18.518 individu-individu yang dilaporkan telah ditahan oleh militer dan polisi Indonesia, 378 diketahui meninggal dalam tahanan. 1.314 tahanan lainnya juga meninggal, tetapi waktu kematian mereka yang pasti tidak diketahui, dengan demikian tidak bisa dipastikan apakah mereka meninggal saat ditahan.
62. Pasukan keamanan Indonesia menggunakan beragam pusat penahanan untuk menahan para tahanan, baik resmi maupun tidak resmi. Termasuk:
- Berbagai bangunan besar yang dikuasai militer, seperti toko, hotel, gedung publik, seperti sejumlah gudang di pelabuhan Dili, dan rumah pribadi. Berbagai bangunan publik dan pribadi digunakan untuk menahan para tahanan ketika terdapat sejumlah besar orang yang ditahan dan tidak cukup tempat. Sebagai contoh pada saat sesudah invasi Dili dan ketika militer mulai memasuki wilayah-wilayah lain, sesudah pemberontakan (*levantamentos*) di sekitar Gunung Kablaki pada 1982, di distrik-distrik timur pada 1983, dan di Alas (Manufahi) pada 1998. Gedung-gedung seperti itu juga digunakan paramiliter dan polisi ketika mereka menahan korban. Contohnya adalah sejumlah penahanan oleh Tim Sukarelawan di Ainaro pada 1991 dan penahanan oleh semua milisi pada 1999.
 - Berbagai gedung militer dan polisi termasuk sejumlah komando militer dan kantor polisi di tingkat subdistrik, distrik, dan provinsi, markas-markas SGI, markas-markas militer, asrama Korem, barak-barak militer, pos-pos militer, dan markas Kopassandha/Kopassus. Dalam sebagian besar kasus, para tahanan ditahan dalam sel-sel tapi kadang mereka dikunci dalam ruangan di markas-markas atau pos-pos, termasuk di dalam toilet.

- Berbagai gedung pemerintah seperti kantor desa, gedung pertemuan desa, atau kantor pemerintahan kecamatan atau kabupaten. Gedung-gedung seperti itu biasanya digunakan dengan keterlibatan atau sepengetahuan pejabat yang bertanggung jawab atas gedung tersebut.
 - Penjara negara: Penjara Comarca di Balide, Dili, langsung digunakan setelah invasi. Penjara negara lain di berbagai daerah baru dibuka pada paruh kedua 1980-an.
 - Struktur-struktur dadakan seperti lubang-lubang di tanah atau gedung yang dibangun dari dahan-dahan atau bambu. Ini paling sering terjadi dalam periode 1978-1979 ketika banyak sekali orang yang menyerah atau tertangkap di berbagai daerah pedalaman.
 - Rumah orang yang ditahan. Para tahanan dijadikan tahanan rumah ketika ada sejumlah besar orang yang ditahan, seperti selama masa invasi dan selama serangan militer setelah pemberontakan (*levantamento*) pada 1982 di Mau Chiga (Hato Builico, Ainaro).
 - Pulau Ataúro. Antara tahun 1980 dan 1983 sekitar 3.500 orang yang merupakan anggota atau dicurigai sebagai anggota jaringan klandestin atau dicurigai mempunyai hubungan apapun dengan pihak Resistansi, dikirim ke pulau gersang tersebut di mana mereka ditahan sampai 1983 dan dalam sejumlah kasus, sampai 1987.
 - Berbagai kamp transit. Kamp-kamp ini didirikan di seluruh wilayah Timor-Leste, digunakan pada akhir 1970-an setelah rakyat yang sebelumnya di bawah kendali Fretilin menyerah secara besar-besaran.
 - Sejumlah penjara di Indonesia. Menurut berbagai laporan yang diterima Komisi, selain sekelompok tahanan yang dikirim ke Kupang, Timor Barat, pada 1983, para tahanan dari Timor-Leste dikirim ke berbagai penjara di Jawa setelah mereka diadili dan dijatuhi hukuman. Mereka biasanya para anggota ternama dari gerakan klandestin atau gerakan Resistansi.
63. Telah menjadi praktik kelembagaan untuk tidak memberikan makanan yang memadai dan air bersih bagi para tahanan atau samasekali tidak memberikan persediaan yang makanan dan tempat penampungan yang memadai untuk para tahanan. Para tahanan sering meninggal karena kelaparan atau sakit di berbagai lokasi penahanan sampai dengan pertengahan 1980-an ketika jumlah tahanan menurun dan berbagai penjara negara dibangun untuk menampung para tahanan. Bahkan setelah periode ini, masih sering terdapat laporan tentang para tahanan yang tidak diberi makan selama beberapa hari atau diberi makanan yang tidak layak dimakan.
64. Telah menjadi praktik kelembagaan untuk menahan para tahanan di berbagai pusat penahanan tak resmi, jauh dari keluarga dan teman mereka. Dalam banyak kasus para keluarga tidak mengetahui apa yang terjadi pada para saudara mereka yang ditangkap dan jika mereka berhasil mengetahui

mereka dilarang berkomunikasi melalui surat atau melakukan kunjungan. Kehadiran ICRC telah memperbaiki situasi ini bagi sebagian tahanan, tapi hanya pada saat ICRC diperbolehkan beroperasi di Timor-Leste dan hanya di penjara-penjara dan pusat-pusat penahanan di mana para perwakilan ICRC mendapat akses.

65. Telah menjadi praktik kelembagaan untuk memindahkan para tahanan di antara pusat-pusat penahanan, kadang antara beberapa tempat dalam semalam. Ini dilakukan untuk membingungkan para korban, untuk memungkinkan berbagai unit militer atau organisasi yang berbeda menginterogasi korban, atau menempatkan para korban dalam penjagaan unit-unit yang berbeda. Kadang para tahanan dipinjam dari satu pusat penahanan oleh sebuah unit militer untuk diinterogasi dan kemudian dikembalikan. Pola ini berlangsung selama masa pendudukan, mulai dari hari-hari pertama invasi.
806. Sejumlah contoh lain tentang kondisi di mana para tahanan biasanya ditahan antara lain:
 66. Menyediakan makanan tapi membuatnya tidak layak dimakan, sebagai contoh menjatuhkannya ke lantai, mencampurnya dengan pecahan kaca atau benda tajam lainnya atau dengan kotoran kucing, atau memberi tahanan makanan yang hangus atau basi.
 67. Melepaskan semua pakaian korban sehingga mereka telanjang atau hanya menggunakan celana dalam. Kadang ini dilakukan sebelum interogasi tapi di sejumlah tempat ini adalah praktik umum untuk menjadikan semua tahanan dalam kondisi seperti demikian.
 68. Menempatkan para tahanan dalam pengurungan yang terisolasi, kadang sampai satu tahun.
 69. Menempatkan para korban dalam sel-sel yang dikenal sebagai 'sel gelap', di mana tidak terdapat cahaya dan ventilasi sangat buruk. Semua pusat penahanan, termasuk penjara-penjara, kantor-kantor polisi, dan komando-komando militer, memiliki sel gelap.
 70. Kondisi sanitasi yang sangat buruk, termasuk tidak menyediakan toilet sehingga para tahanan menduduki kotorannya sendiri atau kotoran orang lain, atau hanya menyediakan toilet kecil untuk sekelompok besar orang.
 71. Membatasi akses para tahanan untuk berbagai aktivitas selama dalam penahanan. Izin berolahraga, membaca buku dan koran, dan bentuk aktivitas santai lainnya ditolak secara rutin. Tetapi sebagian aktivitas dipaksakan pada para tahanan, seperti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia atau memberi hormat pada bendera Indonesia.
 72. Mencegah akses terhadap bantuan atau perwakilan hukum sampai 1990-an dan bahkan sejak 1990-an pun akses yang diperbolehkan terbatas.
 73. Sebelum dan setelah berbagai kunjungan dari ICRC, para pengacara, atau sebuah delegasi asing ke pusat penahanan, kondisi cenderung membaik.

Tetapi, sebagian tahanan dihukum karena telah berbicara dengan para pengunjung tersebut.

74. Kondisi secara menyeluruh kadang membaik ketika para tahanan dipindahkan ke sebuah penjara resmi. Ini khususnya terjadi dengan Penjara Becora di Dili setelah pembukaannya pada 1986. Penganiayaan dan penyiksaan, termasuk pemukulan dan pelecehan oleh para penjaga penjara, penahanan di kurungan terisolasi, dan pembatasan pada berbagai aktivitas santai, komunikasi dengan dunia luar atau kunjungan keluarga, masih terjadi di sejumlah institusi ini tapi tidak terlalu sering.
75. Sebelum akhir 1983 penguasa Indonesia tidak mengadili para tahanan. Para tahanan tidak memiliki jalan untuk menentang penahanan mereka atau meminta tanggal pembebasan. Penahanan mereka tanpa batas. Bahkan ketika sejumlah pengadilan dimulai pada 1983, penguasa Indonesia menahan banyak orang untuk periode waktu yang lama sebelum mengadili mereka. Sejak tahun 1990-an para tahanan yang diadili, dituntut, dan diadili secara relatif cepat. Walaupun demikian, bahkan pada 1990-an banyak tahanan yang tidak diadili. Pada 1999 hampir tidak ada tahanan yang diadili.

Interogasi

807. Komisi menemukan bahwa:

76. Menginterogasi para tahanan adalah praktik kelembagaan. Interogasi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas sang korban, untuk menghukum atau mengintimidasi sang korban atau mendapatkan informasi tentang struktur dan strategi perlawanan, lokasi-lokasi penyimpanan senjata, atau dokumen atau nama para anggota Resistansi lainnya.
77. Pola-pola ini bergeser seiring waktu. Pada tahun-tahun awal pendudukan, militer menggunakan interogasi untuk meningkatkan pengertiannya tentang Resistansi.
78. Ketika polisi menjadi lebih aktif dalam penahanan dan penginterogasian para tersangka, dan para tahanan diajukan ke pengadilan, interogasi juga difokuskan untuk mendapatkan bukti seperti pengakuan, untuk digunakan dalam pengadilan. Para penginterogasi sering telah menyiapkan pengakuan tertulis sebelum interogasi dimulai yang kemudian dibacakan kepada sang tahanan yang kemudian dipaksa menandatangani atau polisi akan memaksa tahanan membuat pengakuan palsu. Banyak tahanan menandatangani pengakuan tersebut hanya untuk mengakhiri interogasi dan penyiksaan.
79. Pada 1999, sebelum Jajak Pendapat, interogasi digunakan untuk mengintimidasi korban dan untuk menyelidiki gerakan berbagai kelompok prokemerdekaan.
80. Telah menjadi praktik kelembagaan untuk menggunakan praktik-praktik yang sangat memaksa pada saat interogasi. Metode-metode tersebut antara lain penggunaan penyiksaan secara luas, ancaman pembunuhan terhadap

para korban atau keluarga korban, menanyakan pertanyaan yang banyak atau membingungkan pada tahanan, atau memutarbalikkan kata-kata tahanan, memberitahukan kepada tahanan bahwa tahanan yang lain telah mengakui sebuah kejahatan yang dituduhkan, dan tidak memberikan kepada tahanan makanan, minuman, fasilitas kebersihan, dan tidur di antara sesi interogasi.

81. Ketika ada perhatian internasional bagi tahanan-tahanan tertentu, perlakuan pasukan keamanan Indonesia terhadap para tahanan selama interogasi menjadi lebih baik.
82. Para tahanan biasanya diinterogasi di dalam pusat-pusat penahanan, dalam sel mereka atau ruangan interogasi. Sebagian kecil orang diinterogasi di rumah sebelum penangkapan. Sebagian tahanan dibawa ke berbagai pusat interogasi khusus untuk diinterogasi, seperti gedung Sang Tai Hoo di Dili. Sebagian tempat ini menjadi terkenal akan buruknya perlakuan mereka terhadap para tahanan. Sebagian tahanan dikirim ke Jawa atau Bali untuk diinterogasi lebih lanjut.
83. Durasi interogasi bervariasi. Kadang para tahanan diinterogasi dalam waktu lama selama beberapa hari dalam usaha “mematahkan” si korban. Sebagian tahanan memiliki jadwal waktu interogasi di mana mereka diinterogasi pada hari yang sama setiap minggu atau pada jam yang sama pada hari-hari tertentu. Pada saat lain, interogasi berlangsung cepat dan memaksa, khususnya jika tujuan dari interogasi tersebut adalah untuk mengintimidasi sang tahanan.
84. Para agen yang berbeda dari institusi yang berbeda sering menginterogasi para tahanan, baik pada saat bersamaan atau bergantian. Biasanya para opsir intelijen bertanggung jawab atas interogasi. Dalam beberapa kasus, perwira militer berpangkat tinggi dari Jakarta terbang ke Timor-Leste untuk menginterogasi para korban.
85. Berbagai taktik yang digunakan para anggota klandestin selama interogasi termasuk menyebutkan nama para rekan yang telah ditangkap sehingga memberikan informasi yang sebenarnya sudah dimiliki para penginterogasi dan mengambil tanggung jawab atas berbagai tindakan orang lain.

Penyiksaan dan penganiayaan

808. Komisi menemukan bahwa:

86. Para anggota pasukan keamanan Indonesia dan para pembantunya melakukan, mendorong, dan memaklumi penyiksaan dan penganiayaan secara luas dan sistematis terhadap para korban selama periode pendudukan Indonesia atas Timor-Leste. Dalam sebagian kasus penyiksaan telah mengakibatkan kematian, kadang sebagai akibat langsung penyiksaan yang diterapkan kepada korban dan kadang sebagai akibat luka-luka yang dialami selama penyiksaan tidak diobati.
87. Para korban penyiksaan dan penganiayaan hampir semuanya adalah lelaki, berumur memasuki dinas militer dan terlibat dalam kelompok-

kelompok Fretilin/Falintil atau prokemerdekaan lainnya. Para korban yang mengidentifikasi diri mereka sebagai warga sipil adalah grup terbesar kedua yang mengalami penyiksaan dan penganiayaan. Orang-orang ini biasanya adalah para orang yang dicurigai sebagai anggota grup Resistansi, para warga sipil di berbagai desa yang diincar karena mendukung atau menyembunyikan para anggota Fretilin/Falintil, atau keluarga atau rekan para anggota Fretilin/Falintil atau sejumlah grup Resistansi lainnya.

88. Pasukan keamanan Indonesia disebut sebagai pelaku langsung dalam 64% kasus penyiksaan yang dilaporkan dan 55% dari kasus penganiayaan yang dilaporkan. Institusi-institusi yang berbeda-beda dalam tubuh aparat keamanan memainkan peran utama pada saat-saat yang berbeda. Pada awal pendudukan, batalion dan opsir-opsir militer terlibat dalam sebagian besar kasus penyiksaan, khususnya para perwira intelijen. Antara 1985 dan 1987, Kopassandha/Kopassus terlibat langsung dalam banyak kasus penyiksaan. Pada akhir 1990-an keterlibatan polisi dalam menyiksa para tahanan meningkat dan memuncak pada 1999.
89. Para pendukung Timor juga sangat terlibat dalam penyiksaan para korban. Mereka disebut bertanggung jawab atas 35% kasus penyiksaan yang dilaporkan dan 40% kasus penganiayaan yang dilaporkan. Dalam banyak kasus, para korban disiksa oleh para pendukung Indonesia atas perintah pihak militer atau dilakukan bersama dengan pihak militer. Mereka memainkan peran yang kurang menonjol dibandingkan pihak militer dalam semua tahun kecuali 1999. Pada 1999 mereka adalah pelaku utama kekerasan terhadap para korban.
90. Mayoritas tindakan penyiksaan dan penganiayaan dilakukan pada saat atau sesudah penangkapan atau di dalam penahanan. Sebagian korban tidak disiksa dan diperlakukan secara buruk di luar tempat penahanan, termasuk dianiaya di muka umum, di rumah mereka, di sebuah lapangan atau dalam perjalanan menuju tempat penahanan.
91. Tujuan penyiksaan adalah untuk mendapatkan informasi dari korban, menghukum korban, mengancam korban, mempermalukan korban, mengintimidasi korban atau orang lain yang mempunyai kesetiaan politik sama, atau memaksakan perubahan dalam kesetiaan korban.
92. Penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan lainnya biasanya terjadi ketika para tahanan pertama tiba di tempat penahanan atau selama interogasi. Hal tersebut dilakukan di dalam sel-sel, kadang di depan tahanan lainnya dan kadang di berbagai ruang khusus interogasi. Pada tahun-tahun awal pendudukan, militer Indonesia menggunakan sejumlah bangunan secara khusus untuk menyiksa tahanan.
93. Penyiksaan dan penganiayaan secara terbuka di publik sering terjadi selama masa pendudukan, tapi secara khusus terjadi pada 1999. Tindakan tersebut bukan saja menyebabkan rasa sakit dan malu pada korban, tapi juga dimaksudkan untuk meneror orang-orang yang menyaksikan.

Sebaliknya, banyak penyiksaan dan penganiayaan dilakukan secara rahasia, jauh dari pengetahuan orang-orang yang dicintai korban ataupun dari mata masyarakat internasional.

94. Selama masa pendudukan, korelasi antara penyiksaan atau penganiayaan dan penahanan meningkat. Selama periode 1985-1998, meskipun lebih sedikit orang yang ditahan, orang-orang yang ditahan tersebut lebih besar kemungkinannya mengalami penyiksaan dibanding pada periode 1975-1984 ketika lebih sering terjadi penangkapan massal.
95. Tindakan-tindakan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat lainnya yang berikut ini sering digunakan oleh pasukan keamanan:
 - Memukul dengan kepalan tangan atau dengan alat-alat seperti tongkat kayu atau dahan pohon, besi batangan, popor senapan, rantai, martil, ikat pinggang, kabel listrik
 - Menendang, biasanya sambil memakai sepatu bot militer atau polisi, termasuk di sekitar kepala dan muka
 - Menonjok dan menampar
 - Mencambuk
 - Memotong dengan pisau
 - Mengiris dengan silet
 - Meletakkan jari kaki seseorang di bawah kaki kursi atau meja lalu satu atau lebih orang duduk di atasnya
 - Membakar bagian tubuh korban, termasuk alat kelamin korban, dengan rokok yang menyala atau korek gas
 - Menyetrum bagian-bagian tubuh korban, termasuk alat kelamin korban
 - Mengikat dengan erat-erat tangan dan kaki seseorang atau mengikat korban dan menggantungnya di sebuah pohon atau atap
 - Menggunakan air dengan berbagai cara, termasuk menahan kepala seseorang di dalam air; merendam korban di dalam bak air untuk periode yang lama, kadang sampai tiga hari; membasahi dan melunakkan kulit korban dalam air sebelum memukulinya; memasukkan korban dalam drum berisi air dan menggelindingkannya; mengguyur korban dengan air yang sangat panas atau sangat dingin; mengguyur korban dengan air yang sangat kotor atau air comberan
 - Pelecehan seksual, penyiksaan, dan penganiayaan dalam bentuk seksual atau pemerkosaan saat dalam penahanan. Para perempuan adalah korban utama dalam bentuk pelecehan ini
 - Memotong telinga korban untuk menandai korban
 - Mengikat korban di belakang sebuah mobil dan memaksanya untuk berlari di belakangnya atau terseret di tanah

- Meletakkan buaya darat atau biawak (*lafaek rai maran*) dengan gigi dan cakar yang tajam bersama korban dalam tangki air dan menyebabkan biawak tersebut menggigit bagian-bagian yang lembek dari tubuh korban termasuk kelamin korban
 - Mencabut kuku jari tangan dan kaki menggunakan tang
 - Melindas korban dengan sepeda motor
 - Memaksa korban untuk meminum air kencing seorang prajurit atau memakan barang-barang yang bukan untuk dimakan seperti kadal kecil yang hidup atau sepasang kaos kaki
 - Membiarkan korban di bawah terik matahari untuk periode lama
 - Mempermalukan para tahanan di depan lingkungannya, sebagai contoh, memaksa mereka berdiri atau berjalan sekeliling kota dalam keadaan telanjang
 - Mengancam mati korban atau keluarga korban atau melukai anggota keluarga korban di depan korban
96. Terdapat berbagai contoh lain bentuk-bentuk penyiksaan dan penganiayaan dan tidak manusiawi lain yang tidak dilaporkan secara luas, tetapi tetap mengonfirmasikan pola umum pelecehan fisik yang luas dan sistematis terhadap para tahanan. Berbagai hal tersebut termasuk:
- Menggosokkan cabai ke mata korban
 - Memaksa korban untuk menyapu lantai menggunakan tubuhnya,
 - Memaksa korban membawa kepala orang untuk berkeliling di desa korban
 - Memukuli dua korban laki-laki sementara alat kelamin mereka saling terikat
 - Memotong kuping korban dan memaksa korban untuk memakannya
 - Mengikat korban di dalam sebuah karung berisi sejumlah ular
 - Memasahi sekelompok tahanan dengan bensin dan mengancam akan membakar mereka hidup-hidup
97. Selain penganiayaan fisik, para tahanan juga mengalami penyiksaan mental dan emosional dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan. Sejumlah metode tersebut termasuk:
- Menawan para tahanan selama periode yang tidak pasti tanpa akses kepada keluarga dan teman-teman
 - Menawan para tahanan selama periode yang cukup lama dalam kurungan terisolasi atau dalam sel-sel tanpa cahaya dan sedikit ventilasi
 - Membawa tahanan ke tempat yang digunakan untuk dieksekusi di luar hukum dan membuat korban percaya bahwa mereka akan dibunuh, bahkan sampai menembak ke arah korban
 - Pelecehan dan penghinaan secara verbal

- Memaksa para korban untuk saling memukul
- Menyiksa seorang anggota keluarga di ruang bersebelahan sehingga si korban dapat mendengar teriaknya, atau menyiksa atau mengancam untuk menyiksa seorang anggota keluarga di depan korban
- Menutupi mata atau menggunakan kain hitam, helm, atau ember ke kepala korban pada saat interogasi dan penyiksaan
- Menggunakan simbolisme untuk mempermalukan dan mematahkan semangat si korban seperti memaksa korban untuk meminum air bekas merendam bendera Indonesia, menulis “saya adalah Fretilin” di kening para korban, memaksa para korban menyanyikan lagu-lagu Fretilin atau Portugis terkenal, atau sebaliknya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, memaksa para tahanan duduk di atas bendera Fretilin atau Portugis, memukul tahanan yang sedang menggunakan bendera Portugis atau Fretilin, atau mengikat korban ke tiang bendera yang mengibarkan bendera Indonesia
- Menghina agama si korban seperti mematahkan salib si korban atau mengikat korban pada sebuah salib
- Meludahi korban
- Mencegah korban tidur dengan cara-cara seperti memutar musik keras-keras di tempat tahanan sepanjang malam
- Menelanjangi dan memegang kemaluan para tahanan, baik laki-laki maupun perempuan

Pembebasan

98. Pasukan keamanan jarang melepaskan para tahanan politik secara mutlak.
99. Dalam beberapa kasus para tahanan politik dipaksa membuat semacam pernyataan kesetiaan pada Indonesia termasuk:
 - Menandatangani sebuah deklarasi (*clearing list*) di mana mereka bersumpah setia pada bendera Indonesia dan berjanji tidak lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan klandestin
 - Meminum air bekas rendaman bendera Indonesia
 - Berpartisipasi dalam sumpah darah tradisional dengan meminum darah hewan dan manusia. Ini adalah tindakan simbolis yang sangat kuat dalam budaya Timor yang diambil oleh pihak militer dan kemudian milisi, untuk keperluan mereka sendiri
100. Pembayaran dalam bentuk uang tunai atau benda sering diminta pada saat pembebasan. Insiden pemerasan meningkat signifikan pada 1999.
101. Pasukan keamanan juga mengembangkan berbagai cara memonitor para tahanan setelah mereka dibebaskan. Cara-cara ini termasuk di dalamnya menggunakan mereka sebagai tenaga kerja paksa atau merekrut mereka menjadi pasukan keamanan, organisasi pertahanan sipil atau paramiliter,

atau memaksa mereka mencari saudara-saudaranya yang belum menyerah. Yang lainnya diberikan status ‘tahanan luar’ yang berarti bahwa mereka masih berada dalam pengawasan ketat.

102. Sebagian besar tahanan diharuskan untuk melapor (wajib lapor) ke pangkalan militer, kantor polisi, atau agensi lain secara reguler setelah pembebasan mereka, kadang selama beberapa tahun.

Catatan Akhir

1. Pasal 3 UDHR, pasal 9 ICCPR dan hukum kebiasaan: Komentar Umum (*General Comment*) Komite HAM No.24, paragraf 8.
2. Lihat “Lembar Fakta No.26 mengenai Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang”, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM; lihat juga, misalnya, Berbagai opini tahun 2003 yang disetujui oleh Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang, E/CN.4/2004/3/Add.1.
3. Komite HAM, Komentar Umum No.8, paragraf 2; Lihat juga *Jijon v Ecuador* (1992), HRC Comm. No. 227/88, di mana suatu penundaan selama lima hari untuk membawa seorang tahanan ke hadapan hakim dianggap melanggar Pasal 9(3) ICCPR.
4. Pasal 9(3) ICCPR.
5. Pasal 5 UDHR, Pasal 7 ICCPR, dan hukum kebiasaan: Komite HAM, Komentar Umum No.24, paragraf 8.
6. Lihat, misalnya, pasal 1(1) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat.
7. Lihat, misalnya, Komentar Umum Komite HAM No.20, paragraf 2.
8. *Mukong v Cameroon* (1994) HRC Comm. No. 458/91 pada paragraf 9,4.
9. Berbagai Pengamatan Akhir Komite Menentang Penyiksaan tentang Israel, A/52/44, 9/5/97 di paragraf 257; lihat juga *Ireland v UK* (1978) ECHR Applic No 5310/71, di paragraf 96 dan 167.
10. Berbagai Pengamatan Akhir Komite Menentang Penyiksaan tentang Israel, A/52/44, 9/5/97 di paragraf 257.
11. Berbagai Pengamatan Akhir Komite Menentang Penyiksaan tentang Israel, A/52/44, 9/5/97 di paragraf 257; lihat juga *Ireland v UK* (1978) ECHR Applic. No 5310/71, di paragraf 96 dan 167.
12. Berbagai Pengamatan Akhir Komite Menentang Penyiksaan tentang Israel, A/52/44, 9/5/97 di paragraf 257.
13. Pasal 5 UDHR, Pasal 7 ICCPR, dan hukum kebiasaan: Komite HAM, Komentar Umum No.24, paragraf 8.
14. Pada pelanggaran pasal 5 UDHR; Pasal 7 ICCPR, pasal 16 CAT.
15. Pasal 10(1) ICCPR, dan hukum internasional kebiasaan: Komite HAM, Komentar Umum No.29, paragraf 13(a). Lihat juga “Berbagai aturan Minimum Standar untuk Perlakuan terhadap Tawanan”; “Batang Tubuh dari Berbagai Prinsip Utama untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada dalam Penahanan atau Pemencaraan dalam Bentuk Apapun” dan “Prinsip-prinsip Dasar untuk Perlakuan terhadap Tawanan.
16. Komite HAM, Komentar Umum No.21, paragraf 3.
17. Komite HAM, Komentar Umum No.20, paragraf 6; Komite HAM, Komentar Umum No.7, paragraf 2; *El-Megreisi v Libyan Arab Jamahiriya* (1990), HRC Comm. No. 440/90, paragraf 5,4; *Mukong v Cameroon* (1994), HRC Comm. No. 458/91 di paragraf 9,3-9,4.
18. Pernyataan HRVD 7659; 2399; 1123; 5606; 8354; 6155; 4677; 5036; 3751 dan 3728.
19. José Ramos-Horta, *Timor Leste: Amanha em Dili*, Dom Quixote, Lisabon, 1994, h. 107-113.
20. Wawancara CAVR dengan Armindo Soares Mariano, Kupang (Nusa Tenggara Barat), 20 Juli 2004.
21. Wawancara CAVR dengan José Catarino Grigorio Magno Trindade de Mello (Labut Mello), Kupang, Indonesia, 23 Juli 2004.
22. Paulo Freitas, Kesaksian dalam Audiensi Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.

23. Francisco Xavier do Amaral, Kesaksian pada Audiensi Publik CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
24. João Carrascalão, Kesaksian pada Audiensi Publik CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
25. Wawancara CAVR dengan Mário Nicolau dos Reis, Dili, 27 Juli 2003.
26. Pernyataan 2447 - HRVD. João Lopes tidak menyebutkan tanggal penahanannya.
27. HRVD Statement 2412. Lihat juga HRVD Statement 5408.
28. Wawancara CAVR dengan Lucio Dias Marques, Maliana, Bobonaro, 13 Juni 2003.
29. Wawancara CAVR dengan Manuel Agustino Freitas, Bobonaro, 12 Juni 2003.
30. Mario Carrascalão, Kesaksian pada Audiensi Publik di CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-1976, Dili, 15-18 Desember 2003.
31. Wawancara CAVR dengan Lucio Dinis Marques, Maliana, Bobonaro, 13 Juni 2003.
32. Wawancara CAVR dengan Mário Nicolau dos Reis, Dili, 27 Juli 2003.
33. Wawancara CAVR dengan Lucio Dinis Marques, Maliana, Bobonaro, 13 Juni 2003.
34. Pernyataan HRVD 5062.
35. Wawancara CAVR dengan Mário Nicolau dos Reis, Dili, 27 Juli 2003.
36. Xanana Gusmão, "The Coup and Civil War, 10 August 1975" dalam Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo, Uma Patria*, Lisbon, Editora Colibri, 1994.
37. Wawancara CAVR dengan Miguel Agostinho Freitas, Carabau, Bobonaro, 12 Juni 2003. Manuel memberikan kesaksian pada Audiensi Publik mengenai Konflik Antar Partai 1974-76, Dili, 15-18 Desember 2003.
38. Pernyataan HRVD 5036
39. Pernyataan HRVD 5694
40. Pernyataan HRVD 5699
41. Pernyataan HRVD 3745
42. Pernyataan HRVD 5698
43. Pernyataan HRVD 3784
44. Profil CAVR Komunitas Desa Fatukero, Subdistrik Railaco, Distrik Ermera, 27 Maret 2003.
45. Wawancara CAVR dengan Lourenço dos Santos, Ermera, 25 Agustus 2003; Manuel Duarte, Hatolia, Ermera 23 September 2003; Florentino de Jesus Martins, Ermera 25 Juni 2003. Pernyataan 6442 HRVD.
46. Berbagai pernyataan HRVD 6203. Eufasia de Jesus Soares, Gleno, Ermera, 25 September 2003. Ia mengatakan bahwa 32 anggota dibunuh di tempat penahanan. Lihat Bab tentang Eksekusi Di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa.
47. Pernyataan HRVD 8330.
48. Wawancara CAVR dengan Adelino Soares, 12 Oktober 2003.
49. Pernyataan HRVD 8346.
50. Manuel Duarte, Kesaksian pada Audiensi Publik CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976, Dili 15-18 Desember 2003.
51. Pernyataan HRVD 1084; 6202; 1039; dan 6155.
52. Pernyataan HRVD 1080; 1730; 5102; dan 1663.
53. Pernyataan HRVD 3570; 3596; 3541; 3502; 3559; 2107; dan 3570.
54. Pernyataan HRVD 4568; 8262.
55. Pernyataan HRVD 8262.
56. Pernyataan HRVD 1071.
57. Pernyataan HRVD 1772.
58. Pernyataan HRVD 1088.
59. Pernyataan HRVD 1745.
60. Pernyataan HRVD 1077.
61. Ibid.
62. Wawancara CAVR dengan Lay Konen (Manisera), Mandarin-Dili, 2003.
63. Wawancara CAVR dengan José Guterres Dili, 19 Juli 2004 dan dengan João Godinho Dili, 26 Juli 2004.

64. Pernyataan HRVD 2455 dan wawancara CAVR dengan João Godinho, Dili, 26 Juli 2004.
65. Wawancara dengan João Godinho, Idem
66. Wawancara CAVR dengan José Pinto Guterres, Bairro, Maliana, 19 Juli 2004.
67. Ibid.
68. Pernyataan 2600 HRVD.
69. Pernyataan HRVD 2412.
70. Pernyataan HRVD 2412; 4355; 8992; 5606; 5639; 2600; 5622 dan 2454.
71. Pernyataan HRVD 3703.
72. Pernyataan HRVD 5606.
73. Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 10 Juni 2004. Pernyataan HRVD 8992.
74. Pernyataan 5622 HRVD.
75. CAVR, Profil Komunitas Desa Guda, Subdistrik Lolotoe, Bobonaro, 26 Agustus 2003.
76. Pernyataan HRVD 5472 dan 5486 HRVD.
77. Pernyataan HRVD 5472 .
78. Pernyataan HRVD 5486
79. Pernyataan HRVD 1585
80. Wawancara CAVR dengan Santina de Jesus Soares Ly, Baucau Kota, 10 Oktober 2003, Pernyataan 6119; 2399; 7634 dan 7764 HRVD.
81. Pernyataan HRVD 7634.
82. Pernyataan HRVD 6119
83. Pernyataan HRVD 2399
84. Pernyataan HRVD 1994
85. Pernyataan HRVD 0293
86. Pernyataan HRVD 5904
87. Pernyataan HRVD 1994
88. Wawancara CAVR dengan Edmundo da Conceição Silva, Denpasar, Bali, 3 Agustus 2004
89. Wawancara CAVR dengan José da Conceição, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 24 Agustus 2004.
90. Pernyataan HRVD 3447
91. Wawancara CAVR dengan Adriano João, op. cit.
92. Pernyataan HRVD 5904
93. Pernyataan HRVD 5450
94. James Dunn, *A People Betrayed*, 1966, h. 187
95. Wawancara CAVR dengan Rogério Tiago de Fatima Lobato, mantan Komandan Pasukan Bersenjata Fretilin, Menteri Dalam Negeri saat ini, Dili, 26 Agustus 2003.
96. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
97. Wawancara CAVR dengan Rogério Tiago de Fatima Lobato, Dili, 26 Agustus 2003; Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
98. Wawancara CAVR dengan Filomeno Pedro Cabral Fernandes, Dili, 5 Mei 2004.
99. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
100. Wawancara CAVR dengan Paulo Freitas da Silva, mantan Presiden Partai Trabalhista, Dili, 9 Juli 2003.
101. Pernyataan HRVD 8152; 4987
102. Wawancara CAVR dengan Assis dos Santos, Dili, 2003.
103. Rogério Tiago de Fatima Lobato, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, Dili 15-18 Desember 2003.
104. Rogério Lobato, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, Dili, 15-18 Desember 2003
105. Wawancara CAVR dengan Fransisco Gonçalves, Dili, 14 Juni 2003.
106. Pernyataan HRVD 3764
107. Pernyataan HRVD 9081
108. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 2004

109. Mari Alkatiri, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal, 15-18 Desember 2003
110. Komite Palang Merah Internasional, *East Timor Relief Operation, 16 September 1975*. Email dari Noel Barrow, aktivis Palang Merah Australia, Kantor Nasional, Melbourne ke CAVR, 8 Oktober 2004. Oleh karena sifat kerahasiaan rekaman ICRC mengenai kunjungan organisasi tersebut ke penjara, tidak ada perincian khusus yang tersedia
111. Pernyataan HRVD 6146
112. Pernyataan HRVD 3764 dan 9081.
113. Wawancara CAVR dengan Frederico Almeida Santos, Dili, 2003.
114. Wawancara CAVR dengan Anselmo dos Santos, Maubara, Liquiça, 9 Maret 2004.
115. Wawancara CAVR dengan Monis da Maia, Dili, 5 Desember 2004.
116. Wawancara CAVR dengan Rafael do Nascimento, Aileu, Juni 2003.
117. Pernyataan HRVD 1413.
118. Wawancara CAVR dengan Monis da Maia, Dili, 5 Desember 2003.
119. Wawancara CAVR dengan João da Costa, Same, Manufahi, 24 Juni 2003 dan Monis da Maia, Dili, 5 Desember 2003.
120. Wawancara CAVR dengan Monis da Maia, Dili, 5 Desember 2003; Monis da Maia, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
121. Wawancara CAVR dengan João da Costa, Same, Manufahi, Letefoho, Same, 24 Juni 2003
122. Lihat, misalnya Pernyataan HRVD 3595.
123. Pernyataan HRVD 2156.
124. Pernyataan HRVD 3594.
125. Pernyataan HRVD 6146
126. Pernyataan HRVD 6357
127. Pernyataan HRVD 3568.
128. Pernyataan HRVD 9062.
129. Pernyataan HRVD 8300.
130. Pernyataan HRVD 6409
131. Pernyataan HRVD 6409.
132. Pernyataan HRVD 8337; 2220; 8371.
133. Pernyataan HRVD 4971; 5975; 7201; 5982.
134. Pernyataan HRVD 2694.
135. Pernyataan HRVD 2375; 7658; 9056
136. Pernyataan HRVD 8040.
137. Pernyataan HRVD 9056.
138. Clementino dos Reis Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal Bersenjata 1974-76, 15-18 Desember, 2003.
139. Pernyataan HRVD 2375
140. Paulo Freitas, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal, 1974-76, Dili, 15 Desember 2003.
141. CAVR, profil komunitas Desa Rasa, Subdistrik Lospalos, Distrik Lautém, 1 Maret 2004.
142. Wawancara CAVR dengan Edmundo da Conceição Silva, Denpasar, Bali (Indonesia), 3 Agustus 2004.
143. Ibid.
144. CAVR, profil komunitas Desa Bauro, Subdistrik Lospalos, Distrik Lautém, 26 Januari 2004.
145. Pernyataan HRVD 5919; 4541; 5853; 5930.
146. Pernyataan HRVD 5919.
147. Pernyataan HRVD 4541.
148. Pernyataan HRVD 5853.
149. Pernyataan HRVD 6018.
150. Paulo Freitas, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal Bersenjata 1974-76, Dili, 15-18 Desember 2003.

151. Pernyataan HRVD 6502; 7995; 8025; 1918; 6501; 8021.
152. Pernyataan HRVD 6502.
153. Pernyataan HRVD 7946.
154. CAVR, profil komunitas Desa Carabau, Cotabot, Tebabui, Maliubu dan Colimau, Subdistrik Bobonaro, Distrik Bobonaro, 24 Oktober 2003, profil komunitas Desa Lourba,
155. Pernyataan HRVD 2540
156. Pernyataan HRVD 1082. Lihat juga Pernyataan HRVD 8347.
157. Pernyataan HRVD 5546.
158. Pernyataan HRVD 8152
159. Pernyataan HRVD 5524.
160. Pernyataan HRVD 0186; 5546; 1162; 8152.
161. 68 Kesaksian Mari Alkatiri pada Audiensi Publik Nasional mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, Dili 15-18 Desember 2003.
162. Pernyataan HRVD 3666
163. Pernyataan HRVD 8025.
164. Pernyataan HRVD 8021
165. Pernyataan HRVD 2510
166. Pernyataan HRVD 2375
167. Wawancara CAVR dengan Monis da Maia, Manleuwana, Dili, 5 Desember 2003.
168. Wawancara CAVR dengan Edmundo da Conceição Silva, Denpasar, Bali, 3 Agustus 2004.
169. Wawancara CAVR dengan Assis dos Santos, Dili, 17 Juli 2003; Filomeno Pedro Cabral Fernandes, Dili, 5 Mei 2004; Luis António Aquino Caldas, Dili, 21 Mei 2004, José Catarino Gregório Magno de Mello(Labut Mello), Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, 23 Juli 2004; Armino Soares Mariano, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, 20 Juli 2004.
170. Kampanye Apodeti di Timor Radio, Dili. Salinan kaset yang ada pada CAVR.
171. Mari Alkatiri, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, Dili, 15-18 Desember 2003.
172. Pernyataan HRVD 0826.
173. Pernyataan HRVD 8950.
174. Pernyataan HRVD 6243.
175. Pernyataan HRVD 9034.
176. Wawancara CAVR dengan Luis António de Aquino Caldas, Dili, 21 Mei 2004.
177. Wawancara CAVR dengan Frederico Almeida Santos, Presiden Apodeti yang proreferendum, Dili, 2003.
178. Kesaksian mantan tahanan di penjara *subdistrik* di Same (wawancara CAVR dengan Monis da Maia, Manleuana, Dili, 5 Desember 2003, João da Costa, Letefoho, Same, 24 Juni 2003, Bento Reis, Same, 2004)
179. Wawancara CAVR dengan Bento Reis, Same, 2004.
180. Monis da Maia, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003
181. Makalah penelitian CAVR dengan tema Konflik Partai: Kasus 7, Kumpulan Tinjauan Kasus, Januari 2004.
182. Pernyataan HRVD 3265.
183. Monis da Maia, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003
184. Wawancara CAVR dengan Eufrazia de Jesus Soares, Gleno, Ermera, Oktober 2003
185. Wawancara CAVR dengan José Maukabae, Maubara, Liquiça, 9 Maret 2004.
186. Wawancara CAVR dengan Rafael do Nascimento, Aileu, Juni 2003
187. Wawancara CAVR dengan Monis da Maia, 5 Desember 2003, Rafael do Nascimento, Aileu, Juni 2003
188. Wawancara CAVR dengan Amelia Mesquita, Selo, Malere (Aileu), 27 Juni 2003
189. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Pemimpin ASDT/Fretilin 1974-1977, Presiden RDTL pertama 1975-1977, Dili, 28 Agustus 2003.

190. António Serpa, kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik 1974-76, Dili, 15 Desember 2003.
191. Wawancara CAVR dengan João da Costa, Letefoho, Same, 24 Juni 2003
192. Wawancara CAVR dengan Monis da Maia, Dili, 5 Desember 2003.
193. Wawancara CAVR dengan Edmundo da Conceição Silva, Bali, Indonesia, 3 Agustus 2004, José de Conceição, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 24 Agustus 2004.
194. Wawancara CAVR dengan Edmundo da Concaição Silva, Denpasar, Bali, 3 Agustus 2004.
195. Pernyataan HRVD 1082; 8347
196. Pernyataan HRVD 6416
197. Pernyataan HRVD 2375.
198. Paulo Freitas, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
199. Wawancara CAVR dengan Assis dos Santos, Dili 2003; Luis António de Aquino Caldas, Palapaço, Dili, 21 Mei 2004; José Maukabae, Maubara, Liquiça, 9 Maret 2004; dan Filomeno Pedro Cabral Fernandes, Dili, 5 Mei 2004.
200. Xanana Gusmão, kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
201. Wawancara CAVR dengan José Maukabae, Maubara, Liquiça, 9 Maret 2004.
202. António Ximenes Serpa, Kesaksian kepada Audiensi Publik nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, Dili, 15-18 Desember 2003.
203. Pernyataan di dalam boks ini ialah ringkasan dari wawancara CAVR dengan Anselmo dos Santos, Maubara, Liquiça, 9 Maret 2004, dan juga wawancara CAVR dengan Frederico Almeida Santos, Dili, 2003.
204. Wawancara CAVR dengan Monis da Maia, Dili, 5 Desember 2003
205. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
206. António Serpa, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, Dili, 15-18 Desember 2003.
207. Wawancara CAVR dengan José Maukabae, Maubara, Liquiça, 9 Maret 2004.
208. Assis dos Santos, *Relatorio da Tortura na Prisao de Fretilin 1975, 1976, 1977*. CAVR memiliki satu salinan.
209. Wawancara CAVR dengan Filomeno Pedro Cabral Fernandes, Dili, 5 Mei 2004 dan Assis dos Santos, Palapaço, Dili, 17 Juli 2003, Monis da Maia, Dili, 5 Desember 2003, Bento Reis, Same, 2004.
210. Wawancara CAVR dengan Filomeno Pedro Cabral Fernandes, Dili, 5 Mei 2004 dan Assis dos Santos, Dili, 17 Juli 2003, Monis da Maia, Dili, 5 Desember 2003
211. Wawancara CAVR dengan Luis António de Aquino Caldas, Dili, 21 Mei 2004.
212. Monis da Maia, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, Dili, 15-18 Desember 2003
213. Wawancara CAVR dengan Filomeno Pedro Cabral Fernandes, Dili, 5 Mei 2004, dan Assis dos Santos, *Relatório da Tortura Na Prisão de Fretilin 1975, 1976, 1977*, Museu Dili, Taibessi, Aileu, Maubisse, Same, Uatolari, nahareca, Ossu. Salinan dokumen wawancara tersedia di kantor CAVR.
214. Wawancara CAVR dengan José Maukabae, Maubara, Liquiça, 9 Maret 2004.
215. Wawancara CAVR dengan Filomeno Pedro Cabral Fernandes, Dili, 5 Mei 2004; Assis dos Santos, Dili, 17 Juli 2003.
216. Wawancara CAVR dengan Assis dos Santos, Dili, 17 Juli 2003.
217. Wawancara CAVR dengan José Maukabae, Maubara, Liquiça, 9 Maret 2004
218. Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004.
219. CAVR Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004 dan Mário Nicolau dos Reis, Dili, 21 September 2004.
220. Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004.
221. Ibid.
222. Wawancara CAVR dengan João Veinas, orang yang bertanggung jawab atas desa tersebut pada tahun 1975, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003.

223. Wawancara CAVR dengan Egas da Costa, 19 Mei 2004.
224. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 30 Juni 2004.
225. Ibid.
226. Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004.
227. Wawancara CAVR dengan Mário Nicolau dos Reis, Dili, 21 September 2004 dan José Manuel Monteiro, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004.
228. Wawancara CAVR dengan Pedro Faria, Lospalos, Lautém, ND.
229. João Veinas, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003.
230. Pernyataan HRVD 01697
231. Wawancara CAVR dengan Modesto de Jesus Sanches, mantan penanggung jawab Secai di zona Iliomar, Fuiluro, Lospalos, Lautém, 10 September 2004.
232. Wawancara CAVR dengan Orlando Silva Correia Belo, Lospalos, Lautém, 10 September 2004.
233. Wawancara CAVR dengan Miguel da Silva Ossu, Viqueque, 23 Februari 2003.
234. Wawancara CAVR dengan Luis da Costa, Lisbon, Portugal, 15 Oktober 2003.
235. Wawancara CAVR dengan António da Silva dan Raquel da Silva, Ossu, Viqueque, 10 Juni 2003
236. Pernyataan HRVD 4872
237. Wawancara CAVR dengan Celestino de Carvalho Alves, Fatubesi, Ermera, 6 Oktober 2003.
238. Wawancara CAVR dengan Celestino Alves, Fatubesi, Ermera, 27 Juni 2004, Fatubesi (Ermera, Ermera), 6 Oktober 2003.
239. Wawancara CAVR dengan Celestino de Carvalho Alves, Fatubesi, Ermera, 6 Oktober 2003.
240. Wawancara CAVR, dengan Jerónimo Albino da Silva, Ermera, Ermera, 10 September 2003.
241. Wawancara CAVR dengan Eduardo de Deus Barreto, Gleno, Ermera, 26 Agustus 2004, Wawancara CAVR dengan Celestino Alves, Fatubesi, Ermera, 6 Oktober 2003
242. CAVR, Profil masyarakat Desa Tirilolo, Subdistrik Iliomar, Distrik Lautém, 4 Juli 2003.
243. Constantinho Hornay, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Anak-Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
244. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, Dili, 15-18 Desember 2003. Lihat juga Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
245. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal, Dili, lihat juga Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
246. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004.
247. Xanana Gusmão, "Autobiography" dalam Niner (ed.), *To Resist is to Win*, hal. 51 Wawancara CAVR dengan Horacio de Conceição Savio, Irara, Lospalos, 10 September 2004 dan Modesto de Jesus Almeida Sanches, mantan pemimpin Logistik di zona Iliomar, Lospalos, Lautém, 10 September 2004.
248. Pernyataan HRVD 5418
249. Pernyataan HRVD 01467
250. Wawancara CAVR dengan Thomás de Araújo, Turisca, Manufahi, 14 Oktober 2003
251. Wawancara CAVR dengan Feliciano Soares, Cailaco, Bobonaro, 2003
252. Pernyataan HRVD 03460.
253. Pernyataan HRVD 03448.
254. Pernyataan HRVD 4845.
255. Pernyataan HRVD 4818.
256. CAVR, Proyek penelitian pembunuhan massal, Laporan Lapangan IV: Viqueque, 12-15 Desember 2003, hal 10.
257. CAVR, "Case Summary: The Detention of Mariano Meneses", dokumen riset internal, 2003.
258. Pernyataan HRVD 2099.
259. Pernyataan HRVD 6541.
260. Pernyataan HRVD 2112.
261. Wawancara CAVR dengan António Amado de Jesus Ramos Guterres, 11 Desember 2003.

262. Wawancara CAVR dengan António da Silva dan Raquel da Silva, Ossu, Viqueque, 10 Juni 2003; Bernardo Quintão, 4 Juni 2003.
263. Wawancara CAVR dengan Mário Reis, Dili, 21 September 2004.
264. Wawancara CAVR dengan Filomeno Paixão, Dili, 17 Juni 2004.
265. Wawancara CAVR dengan Horacio Savio, Irara, Lospalos, 10 September 2004; Orlando Silva Correia Belo, Lospalos, Lautém, 11 September 2004; dan José Manuel Monteiro, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004.
266. Wawancara CAVR dengan Mário Nicolau dos Reis, mantan asisten politik, Zona 20 de Maio Centro Leste, Dili, 21 September 2004; Francisco Xavier do Amaral, Presiden pertama Fretilin, kini wakil ketua Parlemen Nasional RDTL, Dili, 18 Juni 2004; Filonimo Paixão, Letnan Kolonel di Falintil/FDTL, Dili, 17 Juni 2004; Xanana Gusmão, Mantan Komandan Falintil, Kini Presiden RDTL, di istana Presiden, Dili, 30 Juni 2004; Egas da Costa Freitas, mantan Asisten Politik Zona 20 de Maio Centro Leste, di rumahnya di Lahane Timur, Dili, 19 Mei 2004; Orlando Silva Correia Belo (Fernando So), mantan sekdes, mantan sekretaris zona [Sacalu, Tutuala dan mantan penanggung jawab *Renal Marabia* (Iliomar, Lautém), Lospalos, Lautém, 10 September 2004; Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004; José da Costa, Kupang, Timor Barat, 24 Agustus 2004; dan Horacio de Conceição Savio, Irara, Lospalos, 10 September 2004.
267. Wawancara CAVR dengan António Amado de Jesus Ramos Guterres, Manatuto, 11 Desember 2003.
268. Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004; Orlando Silva Correia Belo, Lospalos, Lautém, 10 September 2004; Mário Reis, mantan Asisten Politik, Dili, 21 September 2004; dan José Manuel Monteiro, mantan komandan penyerang dan kepala *Renal Nundamar*, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004.
269. Pernyataan HRVD 1742.
270. Wawancara CAVR dengan Adriano João, Bairro Maravilha, Bobonaro, 6 Oktober 2003.
271. Wawancara CAVR dengan Celestino Carvalho Alves, Fatubesi, Ermera, 13 Juni 2003.
272. Wawancara CAVR dengan Clementino dan Silva, Ossu, Viqueque.
273. CAVR Ringkasan Kasus 916.
274. CAVR, Proyek penelitian pembunuhan massal, Laporan Lapangan IV: Viqueque, 12-15 Desember 2003.
275. Wawancara CAVR dengan Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004; Orlando Silva Correia Belo, Lospalos, Lautém, 10 September 2004; Mário Reis, mantan asisten politik, Dili, 21 September 2004; José Manuel Monteiro, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004; dan José Manuel do Santos, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004.
276. CAVR, Profil Masyarakat suco Irabin de Baixo, Uato-Carbau, Viqueque, 26 Agustus 2003
277. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 30 Juni 2004.
278. Pernyataan HRVD 7442.
279. Wawancara CAVR dengan Orlando Silva Correia Belo, Lospalos, Lautém, 10 September 2004.
280. Wawancara CAVR dengan Gaspar Seixas, Iliomar, Lautém, 2003.
281. Wawancara CAVR dengan Modesto de Jesus Sanches, mantan penanggung jawab Secai di Zona Iliomar, Fuiluro, Lospalos, Lautém, 10 September 2004.
282. Wawancara CAVR dengan Horacio de Savio, Irara, Lospalos, 10 September 2004.
283. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 30 Juni 2004.
284. Wawancara CAVR dengan Horacio de Conceição Savio, Lospalos, Lautém, 10 September 2004
285. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004; Kay Rala Xanana Gusmão, Dili, 30 Juni 2004; Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004; Mário Reis, Dili, 21 September 2004; Filonimo Paixão, Dili, 17 Juni 2004; Egas da Costa Freitas, Dili, 19 Mei 2004; Orlando Silva Correia Belo, Lospalos, Lautém, 10 September 2004, dan Horacio de Conceição Savio, Irara, Lospalos, 10 September 2004.
286. Wawancara CAVR dengan José Manuel do Santos, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004.
287. Ibid.
288. Wawancara CAVR dengan José Manuel do Santos, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004; dan Wawancara CAVR dengan José Manuel Monteiro, Remexio, 6 Oktober 2004.
289. Ibid.

290. Wawancara CAVR dengan José Manuel do Santos, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004.
291. Ibid.
292. Ibid.
293. Wawancara CAVR dengan José Manuel do Santos, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004; dan dengan José Manuel Monteiro, Remexio, 6 Oktober 2004.
294. Wawancara CAVR dengan José Manuel do Santos, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004.
295. Wawancara CAVR dengan José Manuel do Santos, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004; dan José Manuel Monteiro, Remexio, 6 Oktober 2004.
296. Ibid.
297. Ibid.
298. Wawancara CAVR dengan José Manuel dos Santos, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004.
299. Wawancara CAVR dengan Maria Fatima Pinto, Dili, 31 Mei 2004.
300. Wawancara CAVR dengan Maria Antónia Santos, Sousa, Laclo, Manatuto, 28 April 2003; José Manuel do Santos, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004; dan José Manuel Monteiro, Remexio, Aileu, 6 Oktober 2004.
301. Wawancara CAVR dengan Maria Antónia Santos, Laclo, Manatuto, 20 Maret 2003.
302. Wawancara CAVR dengan Raul da Costa, Remexio, Aileu, 16 Oktober 2003.
303. Wawancara CAVR dengan Domingos Maria Alves (Ambulan), Lequidoe, Aileu, 15 Oktober 2003
304. Pernyataan HRVD 5761.
305. Pernyataan HRVD 5763
306. CAVR, Proyek Penelitian Pembunuhan Massal, Laporan Lapangan IV: Viqueque, 12-15 Desember 2003.
307. Wawancara CAVR dengan Tomé da Costa Magalhães, Same, Manufahi, 12 Agustus 2004.
308. Wawancara CAVR dengan Valentino da Costa Noronha, Holarua, Manufahi, 14 Agustus 2004.
309. Wawancara CAVR dengan Alexandrino de Jesus, Hatulia, Ermera, 2003.
310. Pernyataan HRVD 2195.
311. Pernyataan HRVD 0292.
312. Pernyataan HRVD 570.
313. Pernyataan HRVD 0570.
314. Pernyataan HRVD 8159.
315. Pernyataan HRVD 8027.
316. Pernyataan HRVD 1132.
317. Pernyataan HRVD 4607.
318. Pernyataan HRVD 1794.
319. Pernyataan HRVD 0175.
320. Pernyataan HRVD 3752
321. Wawancara CAVR dengan Marcus Valadares, Dili, 2 Agustus 2003.
322. Pernyataan HRVD 3826.
323. Wawancara CAVR dengan W2 (sumber rahasia), 24 Agustus 2004, Dili. Lihat juga Wawancara CAVR dengan Rita Ximenes, 10 Desember 2003, Dili.
324. Wawancara CAVR dengan António Caleres Junior, Dili, 2 Oktober 2004.
325. Wawancara CAVR dengan Francisco Calçonha, 31 Agustus 2004, Dili [tidak ada transkrip].
326. Wawancara CAVR dengan António Caleres Junior, Dili, 2 Oktober 2004. Lihat juga Wawancara CAVR dengan Alberto de Oliveira Camara, Dili, 1 September 2004.
327. Wawancara CAVR dengan Maria Olandina Isabel Cairo Alves, Dili, 6 Mei 2004.
328. Untuk contoh kerjasama UDT dan ABRI, lihat: Pernyataan HRVD 1352 dan 2012. Untuk kasus kerjasama Apodeti dan ABRI, lihat Pernyataan HRVD 5728; 5694; 5662; 8086. Untuk kasus tentang anggota Apodeti bertindak sendiri menangkap orang, lihat Pernyataan HRVD 5725 dan 5099.
329. Pernyataan HRVD 5731.
330. Pernyataan HRVD 5730.
331. Pernyataan HRVD 5728.

332. Lihat sebagai contoh Pernyataan HRVD 3752; 4881; 0175; Wawancara CAVR dengan Maria Olandina Isabel Cairo Alves, Dili, 6 Mei 2004. Untuk 1975/1976 lihat Pernyataan HRVD: 3742; 5666; 5107; 5050.
333. Wawancara Neil Barrett dengan Saturnino Belo, Dili, Neil Barret Comarca Video Proyek, Submisi kepada CAVR, Agustus 2002.
334. Wawancara CAVR dengan Afonso Correia Lemos, Comarca, Balide, 5 September 2004.
335. Pernyataan HRVD 3793.
336. Amnesty International, *Statement of Amnesty International's Concern in Indonesia and East Timor*, ASA: 21/05/80, London, 29 April 1980, hal. 10
337. Wawancara CAVR dengan António Caleres Junior, Dili, 2 Oktober 2004.
338. Wawancara CAVR dengan Maria Fatima Maia, Dili, 16 Februari 2003.
339. Ibid.
340. Pernyataan HRVD 5666.
341. Pernyataan HRVD 5730.
342. Wawancara CAVR dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Agustus 2004.
343. Wawancara CAVR dengan Maria Fatima Maia, Dili, 16 Februari 2003.
344. João Baltazar Martins, kesaksian dalam Audiensi Publik CAVR mengenai Penahanan Politik, 17-18 Februari 2003
345. Lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 4881; 5730; 0175; 0113; 3752; 3780; 5050; 0041.
346. Pernyataan HRVD 5730.
347. Wawancara CAVR dengan Maria Olandina Isabel Cairo Alves, Dili, 6 Mei 2004.
348. Ibid.
349. Pernyataan HRVD 4881.
350. Maria Jose Franco Pereira, kesaksian dalam Audiensi Publik CAVR mengenai Penahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003.
351. Pernyataan HRVD 3737.
352. Wawancara CAVR dengan Maria de Fatima Acacio Guterres Leong, Dili, 21 Februari 2003, hal.3
353. Pernyataan HRVD 5010; 1088
354. Pernyataan HRVD 5790.
355. Pernyataan HRVD 4930; 5121.
356. Pernyataan HRVD 1985.
357. Pernyataan HRVD 3358.
358. Wawancara CAVR dengan Maria Olandina Isabel Cairo Alves, Dili, 6 Mei 2004.
359. Pernyataan HRVD 1659.
360. Wawancara CAVR dengan António Junior Caleres, Dili, 2 Oktober 2004.
361. Pernyataan HRVD 4930.
362. Wawancara CAVR dengan Julio Alfaro, Dili, 18 Februari 2003.
363. Wawancara CAVR dengan Maria de Fatima Acacio Guterres Leong, Dili, 21 Februari 2003.
364. Pernyataan HRVD 1138.
365. Pernyataan HRVD 3075.
366. Pernyataan HRVD 4858.
367. Pernyataan HRVD 0051.
368. Pernyataan HRVD 0463.
369. Pernyataan HRVD 3797.
370. Pernyataan HRVD 2012.
371. Pernyataan HRVD 2017.
372. Pernyataan HRVD 0543.
373. Wawancara CAVR dengan Luis Pereira, Laclubar, Viqueque, 12 April 2003.
374. Untuk contoh lihat: Pernyataan HRVD 2091; 5834; 3282; 8908; 5052; 1061; 5834; 7642; 8086; 3086; 2651.
375. Pernyataan HRVD 2651. Lihat juga Pernyataan HRVD 3295; 5712.

376. Informan-informan untuk studi kasus berikut ini, yang sebagian besar bekas tahanan, diwawancarai di Baucau dan sekitarnya oleh dua anggota Tim Peneliti Perempuan CAVR pada tanggal 10-13 Juni 2003: Rosa Victória, Ximenes Ferreira, Antónia Batista, Marcelina Guterres Martins, Santina de Jesus Soares Li, Terezinha da Sa, Florencia Martins Freitas, Norberta dos Reis, Maria Veto Freitas, Zeferino Armando Ximenes (alias Mausaka), João da Costa, dan Carolina Maria Epifania do Rosario. CAVR Tim Peneliti Perempuan, April 2004. Khususnya, lihat Apendiks H: 'Tahanan politik perempuan di Baucau'.
377. CAVR Tim Peneliti Perempuan, *Perempuan dalam Konflik*, khusus Apendiks G: "Gambaran lokasi penahanan di Baucau", 10-13 Juni 2003.
378. Pernyataan HRVD 7528.
379. Wawancara CAVR dengan Cornelio Gama ("L-7"), mantan komandan Regiã 3, Dili, 9 April 2003.
380. Pernyataan HRVD 5662.
381. Pernyataan HRVD 8345.
382. Pernyataan HRVD 8345.
383. Untuk contoh lihat: Pernyataan HRVD 3607; 5834; 6624.
384. Pernyataan HRVD 3072.
385. Ibid.
386. Wawancara CAVR dengan Raul da Costa da Silva Araújo, Remexio, Aileu, 17 Oktober 2003.
387. Pernyataan HRVD 1298.
388. Pernyataan HRVD 7792.
389. Pernyataan HRVD 5417.
390. Pernyataan HRVD 5337.
391. Untuk contoh lihat: Pernyataan HRVD 8392; 3234; CAVR, Wawancara CAVR dengan Alfredo Manuel de Jesus, Distrik Ermera, 8 Oktober 2003; Wawancara CAVR dengan Rui Soares de Araújo, Dili, 27 Oktober 2003; CAVR Profil Komunitas Desa Sibuni, Desa Lour dan Desa Molop, Subdistrik Bobonaro, Distrik Bobonaro, 24 Oktober 2003; CAVR Profil Komunitas Desa Uamoritula, Subdistrik Viqueque, Distrik Viqueque, 6 September 2003.
392. Untuk contoh lihat: Pernyataan HRVD 8561 dan 6442.
393. Untuk contoh lihat: Pernyataan HRVD 5677 dan 2406
394. Pernyataan HRVD 6319.
395. Wawancara CAVR dengan António Junior Caleres, Dili, 2 Oktober 2004.
396. Pernyataan HRVD 8735
397. Ibid.
398. Pernyataan HRVD 5680.
399. Pernyataan HRVD 8112
400. Pernyataan HRVD 5679.
401. Wawancara CAVR dengan Zita Ximenes, Viqueque, 17 September 2003. Lihat juga Pernyataan HRVD 1632 yang diceritakan oleh deponen yang ditangkap karena suaminya ada di hutan.
402. Wawancara CAVR dengan Luis da Costa (Mautidi), Uatolari, Viqueque, 17 September 2003.
403. Ibid.
404. Pernyataan HRVD 0762.
405. Pernyataan HRVD 5680.
406. Untuk penyerahan diri lainnya, lihat Pernyataan HRVD 1469; 9001; 0646; 3479
407. Pernyataan HRVD 0646.
408. Pernyataan HRVD 1469.
409. Pernyataan HRVD 7200
410. HRVD Statement 0682
411. Wawancara CAVR dengan António Peloy, Dili, 1 Juni 2004
412. Wawancara CAVR dengan Xisto Fernandes (alias Helio Espirito Santo), Uato Carbau, Distrik Viqueque, November 2003.
413. Pernyataan HRVD 7525.
414. CAVR, Profil Komunitas Subdistrik Remexio, Distrik Aileu, 23 Mei 2003

415. CAVR, Profil Komunitas Desa Uma Kiiik, Subdistrik Viqueque, Distrik Viqueque, 11 Juli 2003
416. CAVR, Profil Komunitas Sub-Desa Caisido, Subdistrik Baucau, Distrik Baucau,
417. CAVR Profil Komunitas Desa Sibuni, Desa Lour dan Desa Molop, Subdistrik Bobonaro, Distrik Bobonaro, 24 Oktober 2003
418. CAVR Profil Komunitas Desa Sibuni, Desa Lour dan Desa Molop, Subdistrik Bobonaro, Distrik Bobonaro, 24 Oktober 2003
419. CAVR Profil Komunitas Desa Bahatata, Subdistrik Uato Carbau, Distrik Viqueque, 11 September 2003
420. CAVR, Profil Komunitas Desa Dato, Subdistrik Liquiça, Distrik Liquiça, 13 Maret 2003
421. CAVR, Profil Komunitas Desa Hatura, Desa Naroman, dan Desa Isolado, Subdistrik Vera Cruz, Distrik Dili, 9 Juni 2003.
422. CAVR, Profil Komunitas desa Uatuhaco, Subdistrik Venilale, Distrik Baucau, 8 Juli 2003
423. Pernyataan HRVD 6821.
424. Pernyataan HRVD 4586.
425. CAVR, Laporan Khusus mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan di Uma Metan, Alas.
426. Untuk penyerahan diri ke Uma Metan lihat Pernyataan HRVD 4083/2; 4023. Untuk orang-orang yang ditahan dan dibawa ke Uma Metan lihat misalnya Pernyataan HRVD 3494, 5442, 3428, 3431/3, 5413, 3429, 3430.
427. Pernyataan HRVD 5442; 5413; 4083.
428. Pernyataan HRVD 3428; 3431; 4065.
429. CAVR Proyek Penelitian Pembantaian, "Pembantaian di Uma Metan", Manufahi, *Koleksi Ringkasan Kasus*, Maret 2003
430. Wawancara CAVR dengan Mateus Pereira, Uma Metan, Alas, Manufahi, 25 Februari 2003.
431. Profil Komunitas Desa Uamoritula, Subdistrik Viqueque, Distrik Viqueque, 6 September 2003
432. CAVR, Profil Komunitas Desa Manetu, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 8 Juli 2003
433. CAVR Wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Agustus 2004.
434. Ibid
435. CAVR Wawancara dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004; lihat juga bagian mengenai pusat-pusat penahanan Fretilin, dalam Bab ini.
436. Pernyataan HRVD 5353.
437. Wawancara CAVR dengan Luis Maria da Silva (Maukiak), Dili, 16 Desember 2003.
438. Wawancara CAVR dengan José da Silva Amaral, 18 September 2003.
439. Pernyataan HRVD 08561.
440. Pedoman militer No. 01/IV/1982 ditulis oleh Kolonel Rajagukguk. Terjemahan dalam Carmel Budiardjo & Liem Soei Leong, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984 hal.209
441. Wawancara CAVR dengan Maria Pinto, Dili, 31 Mei 2004; Bernardino Ximenes Vilanova, Ataúro, 7 Maret 2002; José Simoes, Dili, 9 Maret 2004; Beatris Miranda Guterres, Lalerek Mutin, Viqueque, 24 Maret 2003; José Gomes Guterres [Lisabon, Portugal, 1988]; Francisco de Carvalho; José de Sousa, seorang mantan polisi militer; Pernyataan HRVD 3490, dan Wawancara Neil Barrett dengan David Dias Ximenes, Proyek Video Comarca, Submisi kepada CAVR, Agustus 2002.
442. Pernyataan HRVD 5032
443. Pernyataan HRVD 5730 dan 5651.
444. Pernyataan HRVD 5730; 5651; 8101; 2094 dan 6943.
445. Wawancara CAVR dengan Serafin do Nascimento, Aileu, 15 Oktober 2003; Pernyataan HRVD 2094; 2069; 8073; 8101; 5032; 6941 dan 6983.
446. Wawancara Neil Barrett dengan Maria Immaculada, Proyek Video Comarca, Submisi kepada CAVR, Agustus 2002.
447. Pernyataan HRVD 6981 dan 2080.
448. Pernyataan HRVD 2069; 5032; 5042; 5092; 5655; 5651; 5679; 5696; 5730; 6941; 6983; 8031; 8275; 8735 dan 3490.
449. Pernyataan HRVD 3793; 6981; 8101; 8073 dan 1498; Wawancara CAVR dengan Serafin do Nascimento, Aileu, 15 Oktober 2003; Wawancara CAVR dengan Bernardino Ximenes Vilanova, Ataúro, 7 Maret 2002; Wawancara CAVR dengan Maria Fatima de Pinto, Dili, 31 Mei 2004; Neil Barrett, Wawancara dengan Maria Immaculada dan David Dias Ximenes, *Proyek Video Comarca*, Submisi kepada CAVR, Agustus 2002.

450. Wawancara Neil Barrett dengan David Dias Ximenes, *Proyek Video Comarca*, Submisi kepada CAVR, Agustus 2002.
451. Jill Jolliffe, Wawancara dengan José Gomes Guterres, Lisbon, 1988, dikutip dalam Association of Ex-Political Prisoners (Assepol), *Political Prisoners in Timor Leste 25 April 1974 – September 1999*, Submisi kepada CAVR, Dili, 2003. (Berikut disebut sebagai Submisi Assepol.)
452. Wawancara CAVR dengan Maria de Fatima Pinto, Dili, 31 Mei 2004. Lihat juga Neil Barrett, Wawancara dengan Maria Immaculada, *Proyek Video Comarca*, Submisi kepada CAVR, Agustus 2002.
453. Lihat, sebagai contoh, Pernyataan HRVD 8101; 6981 dan 6983, Wawancara CAVR dengan Bernardino Ximenes Vilanova, Ataúro, Dili, 7 Maret 2002
454. Pernyataan HRVD 6981.
455. Pernyataan HRVD 6983
456. Pernyataan HRVD 5032.
457. Pernyataan HRVD 6981.
458. Wawancara CAVR dengan Maria Immaculada, Pernyataan HRVD 5037 dan 5042; (David Ximenes, Mariano Bonaparte Soares, Luis Bobonaro, Januari)
459. Bernadino Vilanova, Kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik mengenai Tahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003.
460. Amnesty International, Laporan Tahunan 1981
461. Bernadino Vilanova, Kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik mengenai Tahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003.
462. Wawancara dengan Guilherme da Costa, Bucoli, Baucau, 3 Oktober 2004
463. Wawancara CAVR dengan Vasco Lopes da Silva, Ataúro, Dili, 7 Maret 2002.
464. Wawancara CAVR dengan Adelino Soares, Ataúro, 27 Oktober 2003.
465. Wawancara CAVR dengan Guilherme da Costa, Bucoli, Baucau, 3 Oktober 2004; Wawancara CAVR dengan Mário Nicolau dos Reis, Dili, 21 Agustus 2004.
466. Wawancara CAVR dengan Ceu Lopes Federer, Dili, 30 Agustus 2003 dan 7 April 2004; Wawancara CAVR dengan Mário Reis, Dili, 21 Agustus 2004.
467. Wawancara CAVR dengan Ceu Lopes Federer, Dili, 30 Agustus 2003 dan 7 April 2004; Ringkasan Kasus 1014: Pemindahan Paksa dan Kelaparan.
468. Wawancara CAVR dengan Rosalina da Costa, Ataúro, Dili, 27 Oktober 2003, Wawancara CAVR dengan Adelino Soares, Ataúro, Dili, 27 Oktober 2003.
469. Wawancara CAVR dengan Faustino Gomes de Sousa, Ataúro, Dili, 1 November 2003.
470. Wawancara CAVR dengan Guillerme da Costa, Bucoli, 3 Oktober 2004; Wawancara CAVR dengan Rui Soares da Araújo, Ataúro, 27 Oktober 2003 dan Wawancara CAVR dengan Adelino Soares, Ataúro, Dili, 27 Oktober 2003.
471. Wawancara CAVR dengan Alexandrina Amaral, Ataúro, Dili, 26 Oktober 2003.
472. Wawancara CAVR dengan Faustino Gomes de Sousa, Ataúro, Dili, 1 November 2003
473. Ibid.
474. Abilio dos Santos, kesaksian kepada Audiensi Publik CAVR tentang Kelaparan dan Pemindahan Paksa, Dili, 28-29 Juli 2003; Wawancara CAVR dengan Alexandrina Amaral, Ataúro, Dili, 26 Oktober 2003; CAVR, Ringkasan Kasus 1014: Pemindahan Paksa dan Kelaparan.
475. International Committee of the Red Cross, *Annual Report 1982* (Komite Palang Merah Internasional, Laporan Tahunan 1982); Wawancara CAVR dengan Adelino Soares, Ataúro, Dili, 27 Oktober 2003.
476. Wawancara CAVR dengan: Faustino Gomes de Sousa, Ataúro, Dili, 1 November 2003; Adelino Soares, Ataúro, Dili, 27 Oktober 2003; dan Vasco Lopes da Silva, Ataúro, Dili, 7 Maret 2002.
477. Wawancara CAVR dengan Faustino Gomes de Sousa, Ataúro, Dili, 1 November 2003.
478. Wawancara CAVR dengan Ceu Lopes Federer, Dili, 30 Agustus 2003 dan 7 April 2004.
479. Ibid.
480. Wawancara CAVR dengan Rui Soares da Araújo, Ataúro, Dili, 27 Oktober 2003 dan Maria Fatima da Costa, Same, Manufahi, 26 Februari 2003. Lihat juga Pernyataan HRVD 6530.
481. Wawancara CAVR dengan Maria Fatima da Costa, Same, Manufahi, 26 Februari 2003.
482. Wawancara CAVR dengan Guilherme da Costa, Bucoli, Baucau, 3 Oktober 2004.
483. Wawancara CAVR dengan Adelino Soares, Ataúro, Dili, 27 Oktober 2003.

484. Wawancara CAVR dengan Mário Reis, Dili, 21 Agustus 2004.
485. Wawancara Neil Barrett dengan Maria Immaculada, *Proyek Video Comarca*, Submisi kepada CAVR, Agustus 2002.
486. Pernyataan HRVD 6145; 8744 dan 6081; Wawancara CAVR dengan Celestino Verdial, Ataúro, Dili, 27 Oktober 2003.
487. Wawancara CAVR dengan Celestino Verdial, Ataúro, Dili, 27 Oktober 2003.
488. Pernyataan HRVD 5220.
489. Pernyataan HRVD 7724.
490. Pernyataan HRVD 3820.
491. Pernyataan HRVD 5220; 6530; 2662; 4710.
492. Kesaksian Rosalina da Costa di CAVR Audiensi Publik mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, tanggal 28-29 Juli 2003, Dili.
493. Pernyataan HRVD 4710.
494. Pernyataan HRVD 1967; 0953; 1968; 4885 dan 3345.
495. Wawancara CAVR dengan Adelino Soares, Ataúro, Dili, 27 Oktober 2003.
496. Pernyataan HRVD Mário Nicolau Reis, Baucau, 27 Mei 2004
497. Wawancara CAVR dengan Alexandrina Amaral, Ataúro, Dili, 26 Oktober 2003
498. Lihat CAVR, Laporan Penelitian Tim Perempuan, Laporan Lapangan Mau Chiga, 27 Mei – 1 Juni 2003
499. CAVR, Profil Komunitas Desa Mau Chiga, Subdistrik Hatu-Builico, Distrik Ainaro, 17 September 2003.
500. CAVR, Profil Komunitas Desa Mau Chiga, Subdistrik Hatu-Builico, Distrik Ainaro, 17 September 2003.; CAVR dan Fokupers, Laporan Tim Penelitian Perempuan, Lampiran I.0, *Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dari Sudut Pandang Komunitas: Masyarakat Mau Chiga, 1982-1987*, Mau Chiga, Ainaro, 2003
501. Abilio dos Santos Belo, Kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, Dili, 28-29 Juli 2003.
502. Abilio dos Santos Belo, kesaksian yang diberikan pada audiensi publik CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, Dili, 28-29 Juli 2003; [CAVR dan Fokupers, Laporan Tim Penelitian Perempuan, Lampiran I.0, *Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dari Sudut Pandang Komunitas: Masyarakat Mau Chiga, 1982-1987*, Mau Chiga, 2003
503. Abilio dos Santos Belo, Kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, Dili, 28-29 Juli 2003; CAVR dan Fokupers, Laporan Tim Penelitian Perempuan, Lampiran I.0 *Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dari Sudut Pandang Komunitas: Masyarakat Mau Chiga, 1982-1987*, Mau Chiga, Ainaro 2003.
504. CAVR, Proyek Penelitian Pembantaian, Laporan Lapangan VI – Ainaro, 15-18 Desember 2003.
505. CAVR, Proyek Penelitian Pembantaian, Laporan Lapangan VI – Ainaro, 15-18 Desember 2003
506. CAVR dan Fokupers, Laporan Tim Penelitian Perempuan, Lampiran I.0 *Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dari Sudut Pandang Komunitas: Masyarakat Mau Chiga, 1982-1987* Mau Chiga, Ainaro 2003 hal.10.
507. Ibid
508. Pernyataan HRVD 7149
509. Pernyataan HRVD 4720; 4109; 4708 dan 7252.
510. Pernyataan HRVD 2050
511. Pernyataan HRVD 7193; 7194; 7258; 7259; 7270; 8901; 8038 dan 8047.
512. Pernyataan HRVD 4712.
513. CAVR, Proyek Penelitian Pembantaian, Laporan Lapangan VI – Ainaro, 15-18 Desember 2003.
514. Abilio dos Santos Belo, Kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik mengenai Tahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003; Wawancara CAVR dengan Rui Soares de Araújo, Ataúro, Dili, 26 Oktober 2003; Pernyataan HRVD 7193; 7259; 7270; 8047 dan 7382.
515. CAVR Profil Komunitas Suco Mulo, Subdistrik Hatu-Builico, Distrik Ainaro,
516. CAVR dan Fokupers, Laporan Tim Penelitian Perempuan, Lampiran I.0 *Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dari Sudut Pandang Komunitas: Masyarakat Mau Chiga, 1982-1987* Mau Chiga, Ainaro, 2003, hal 10

517. Abilio dos Santos Belo, Kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, Dili, 28-29 Juli 2003; Wawancara CAVR dengan Rui Soares de Araújo, Ataúro, Dili, 26 Oktober 2003; Pernyataan HRVD 7193; 7259; 7270; 8047 dan 7382
518. Pernyataan HRVD 7193
519. Wawancara CAVR dengan Hermalinda Brittos, Mau Chiga, Ainaro 30 Mei 2003; Wawancara CAVR dengan Crismina de Conceição, Mau Chiga, Ainaro 28 Mei 2003.
520. Wawancara CAVR dengan Francisca Barbosa, Mau Chiga, Ainaro, 28 Mei 2003; Wawancara CAVR dengan Laurentina de Orleans, Mau Chiga, Ainaro 31 Mei 2003; Wawancara CAVR dengan Joaninha Britos, Mau Chiga, Ainaro 30 Mei 2003 dan Wawancara CAVR dengan Zelia da Conceição, Dare, Ainaro, 1 Juni 2003.
521. Wawancara CAVR dengan Manuel Martins, Dare, Ainaro, 1 Juni 2003 dan Wawancara CAVR dengan Joaninha Britos, Mau Chiga, Ainaro, 30 Mei 2003.
522. Wawancara CAVR dengan Amelia dos Santos, Mau Chiga, Ainaro 28 Mei 2003.
523. Wawancara CAVR dengan Bernardino Dos Reis Tilman, Mau Chiga, Ainaro, 15 Januari 2003
524. Pernyataan HRVD 8047.
525. HRVD Pernyataan 4708
526. Pernyataan HRVD 7269
527. Wawancara CAVR dengan Rui de Araújo, Ataúro, Dili, 26 Oktober 2003
528. Wawancara CAVR dengan RN, Mau Chiga, Ainaro, 28 Mei 2003.
529. Wawancara CAVR dengan Leonel Cardoso Periera, Mau Chiga, Ainaro, 30 Mei 2003.
530. Wawancara CAVR dengan Adelino de Araújo, Mau Chiga, Ainaro, 29 Mei 2003
531. CAVR dan Fokupers, Laporan Tim Penelitian Perempuan, Lampiran I.0 *Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dari Sudut Pandang Komunitas: Masyarakat Mau Chiga, 1982-1987*, Mau Chiga, Ainaro, 2003.
532. Pernyataan HRVD 7252.
533. Ibid.
534. Ibid.
535. Pernyataan HRVD 2316.
536. Pernyataan HRVD 0853-2
537. Pernyataan HRVD 6788 dan 6013.
538. Pernyataan HRVD 1061.
539. Wawancara CAVR dengan José de Conceição, Kupang, Timor Barat, Indonesia, 24 Agustus 2004
540. CAVR, Proyek Penyelidikan Pembantaian, Laporan Lapangan IV, 12-15 Desember 2003.
541. Pernyataan HRVD 6008 dan 6013.
542. CAVR Profil Komunitas Desa Mehara, Subdistrik Tutuala, Lautém, 10 September 2002; Wawancara CAVR dengan Pedro Faria, mantan ketua Fretilin di distrik Iliomar, Lautém, 1 Juni 2003; Gaspar Seixas, mantan wakil camat Iliomar, Lautém, 29 Mei 2003; Fernando Amaral, kepala desa Fuad, Iliomar, Lautém, 28 Mei 2003.
543. Wawancara CAVR dengan Domingos Alves Fernandes, Lospalos, Lautém 21 Maret 2003.
544. Profil Komunitas Desa Mehara, Subdistrik Tutuala, Distrik Lautém, 10 September 2002.
545. Profil Komunitas Desa Mehara, Subdistrik Tutuala Distrik Lautém, 10 September 2002; Wawancara CAVR dengan Domingos Alves Fernandes, Lospalos, Lautém, 21 Maret 2003.
546. HRVD 3930; 3952; Ernest Chamberlain, *The Struggle in Iliomar: Resistance in rural East Timor*, Point Lonsdale, Australia, 2003
547. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Kerangka Pencarian dan Pengumpulan Data Operasi militer ABRI di Wilayah Timor Timur: Periode 1974-1999*, Jakarta, Maret 2004.
548. CAVR, Ringkasan Kasus Kraras, laporan pendahuluan penelitian dari Wawancara CAVR dengan José Gomes, Olinda Pinto, Martins Miguel, Viana Martina Rangel, Beatris Miranda Guterres, Domingos Amaral, Vasco Tilman Pinto dan Hermenegildo da Cruz, Dili, Januari 2004.
549. Republica Democratica Timor Leste – Fretilin, Laporan, 1985, hal 3-6
550. CAVR, Proyek Penelitian Pembantaian, *Laporan Lapangan IV: Viqueque*, 12-15 Desember 2003 di hal. 7.
551. Wawancara CAVR dengan Tomás Guterres, Afloicai, Uatolari, Viqueque, CAVR, Proyek Penelitian Pembantaian, Laporan Lapangan II, 27 November - 1 Desember 2003.

552. CAVR, Proyek Penelitian Pembantaian, *Laporan Lapangan VI – Viqueque*, 12-15 Desember 2003, hal 7.
553. Mariano Soares, Kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik tentang Tahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003.
554. Pernyataan HRVD 8045.
555. Pernyataan HRVD 0417-03
556. Pernyataan HRVD 6015-04
557. António da Costa (Aitahan Matak), kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik tentang Tahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003.
558. CAVR, Proyek Penelitian Pembantaian, *Laporan Lapangan IV: Viqueque*, 12-15 Desember 2002, hal. 7.
559. CAVR, Proyek Penyelidikan Pembantaian, *Laporan Lapangan IV: Viqueque*, 12-15 Desember 2003, hal. 6-7.
560. Mariano Soares, Kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik tentang Tahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003; Pernyataan HRVD 0007; 8045; 4203; 6015; 6016 dan 6023.
561. Pernyataan HRVD 6015; 6016 dan 6023.
562. Wawancara CAVR dengan Tomás Guterres dari Afaloicai, Uatolari, Viqueque, Proyek Penelitian Pembantaian *Laporan Lapangan II*, 27 Nopember-1 Desember
563. Wawancara CAVR dengan Pastor Maubere (Domingos Soares), Dili, 22 September 2003.
564. Mariano Soares, Kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik tentang Tahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003; Lihat juga Jill Joliffe, *Cover Up: The Inside Story of the Balibo Five*, Scribe Publications, Victoria, 2002, hal 292.
565. Pernyataan HRVD 7523.
566. Pernyataan HRVD 7332.
567. Fretilin, daftar tulisan tangan nama-nama korban di Lautém, Viqueque, Baucau dan Dili, akhir tahun 193-4, disediakan oleh Utusan Fretilin untuk Pelayanan Luar Negeri (*Delegasaun Fretilin im Servicos Na Exterior*) Dokumen No. 4/Ag/84, Timor Leste, 20 Agustus 1984.
568. Ernest Chamberlain, op.cit., 2003, hal. 30.
569. Pernyataan HRVD 2113; 3930; 3934; 3972; 3977; 4371; 4407; 4408; 3925; 3938; 3947; 3949; 3951; 3972; 3986; 3989; 4376; 4387; 4393; 4397; 4399; 4436 dan 4445.
570. Pernyataan HRVD 3951 dan 4402.
571. Pernyataan HRVD 7591.
572. Ernest Chamberlain, op.cit., hal. 30
573. Untuk penangkapan yang melibatkan T389 [orang Timor Leste], lihat Pernyataan HRVD: 2113; 3918; 3930; 3947; 3950; 3952; 3972; 3977; 3985; 3990; 4371; 4387; 4397; 4399 dan 4408. Untuk T390, lihat Pernyataan HRVD: 3918; 3930; 3952; 3977; 3985; 4371; 4387; 4397; 4399 dan 4408. Untuk T801 [orang Timor Leste], lihat Pernyataan HRVD: 3930; 3952 dan 4402. Untuk T802, lihat Pernyataan HRVD: 3930; 3952; 4402 dan 3989.
574. Profil Komunitas Mehara, Subdistrik Tutuala, Distrik Lautém, 10 September 2002
575. Wawancara CAVR dengan Domingos Alves Ferndanes, Lospalos, Lautém 21 Maret 2003.
576. Grasilda Quimaraes, Kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik tentang Tahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003.
577. CAVR Profil Komunitas, kampung Porlamanu, Desa Mehara, Subdistrik Tutuala, Distrik Lautém, 10 September 2002
578. Pernyataan HRVD 1609; 1611; 0741; 0784 dan 0787.
579. Pernyataan HRVD 0717; 0731; 0739 dan 0782.
580. Pernyataan HRVD 0717 dan 0731.
581. CAVR Profil Komunitas, kampung Porlamanu, Desa Mehara, Subdistrik Tutuala, Distrik Lautém 10 September 2002.
582. Ibid.
583. Wawancara CAVR dengan Filipe José Dias de Castro, Tutuala, Lautém, 10 Januari 2003 dan Edmundo da Cruz, kepala desa Com, Subdistrik Lospalos, Distrik Lautém, 10 Januari 2003. Lihat juga Wawancara CAVR dengan Justino Valentim dan Albino da Silva, Dili, 17 April 2004.
584. Wawancara CAVR dengan Abraham Thomás Martino, CAVR Proyek Penelitian Pembantaian, *Laporan Lapangan II*, 1 Desember 2002.

585. Untuk contoh dari Viqueque lihat Pernyataan HRVD:0417; 4128; 8045; 6015; 6023; 4160; 6016; 6957; 7344 dan 7340. Dari Lautém lihat Pernyataan HRVD: 7591, 8000 dan 7607,
586. Wawancara CAVR dengan Isabel da Silva, Desa Beaço, Viqueque, Viqueque, 14 Desember 2002
587. Pernyataan HRVD 6023.
588. Pernyataan HRVD 6016
589. Pernyataan HRVD 7607.
590. Pernyataan HRVD 0007; 8045, Wawancara CAVR dengan Carlos Alfredo Soares, Ataúro, Dili, 26 Oktober 2003
591. Mariano Soares, kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik tentang Tahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003, Wawancara CAVR dengan António Tomás da Costa (Aitahan Matak), Dili, 1 November 2002
592. CAVR, Proyek Penelitian Pembantaian, *Laporan Lapangan IV Viqueque*, 12-15 Desember, 2002, hal. 5.
593. Pernyataan HRVD 3986; 4387.
594. Pernyataan HRVD 3927.
595. Pernyataan HRVD 3949; 3951; 3985; 4003; 4371; 4408; 4436 dan 2291.
596. Pernyataan HRVD 0755; 0760; 0762; 0763; 0771; 0793; 0778; 0741 dan 0758.
597. Pernyataan HRVD 0755
598. Pernyataan HRVD 3927.
599. Pernyataan HRVD 0778. Surat itu diidentifikasi sebagai: Surat Perintah Dandim 1629 Lospalos, Nomor Sprin/028/V/1984, Tanggal 27 Mei 1984
600. HRVD Pernyataan 5164.
601. Pernyataan HRVD 7810; 6148; 7819; 3883 dan 0567.
602. Lihat, misalnya, Pernyataan HRVD 2323 dan 2370.
603. Pernyataan HRVD 2323; 2370; 2371; 2387.
604. Pernyataan HRVD 2371.
605. Pernyataan HRVD 5244. Pernyataan lain dari Manatuto saat ini juga menggambarkan korban penahanan sewenang-wenang dipukuli dengan ikan pari di Manatuto Kodim.
606. Ibid.
607. CAVR, Profil Komunitas dari Desa Fatisi, Subdistrik Laulara, Distrik Aileu, 9 Oktober 2002.
608. Pernyataan HRVD 1437.
609. Pernyataan HRVD 1483.
610. Pernyataan HRVD 1454.
611. Pernyataan HRVD 5045.
612. Pernyataan HRVD 1407.
613. Pernyataan HRVD 1420.
614. Pernyataan HRVD 1483.
615. Submisi Assepol, 2003, hal 7.
616. Wawancara CAVR dengan Mário Nicolau Reis, Baucau, 17 November 2002
617. Wawancara CAVR dengan Mário Reis, Baucau, 17 November 2002.
618. José António de Jesus das Neves, Submisi kepada CAVR, 29 September 2004.
619. Wawancara CAVR dengan António Tomás da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004.
620. Wawancara CAVR dengan António Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 16 Oktober 2003.
621. Wawancara CAVR dengan Henrique Belmero, Dili, 25 Mei 2004 dan António Tomás da Costa (Aitahan Matak), Dili, 1 November 2002, Mariano Soares, Kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik mengenai Tahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003.
622. Wawancara CAVR dengan António Thomas da Costa (Aitahan Matak), Dili, 1 November 2002
623. Wawancara CAVR dengan Francisco Miranda Branco, Dili, 30 Juli 2004
624. Mariano Soares, Kesaksian kepada CAVR Audiensi Publik mengenai Tahanan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003.
625. Wawancara CAVR dengan Mário Nicolau Reis, Baucau, 17 November 2002.
626. Wawancara CAVR dengan Kay Rala Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
627. Wawancara CAVR dengan João Freitas da Camara, Dili, 5 Juni 2004.

628. Wawancara CAVR dengan António Tomás da Costa (Aitahan Matak), Dili, 1 November 2002, 16 Oktober 2003, dan 28 April 2004.
629. Wawancara CAVR dengan Justo dos Santos, Dili, 3 November 2002.
630. Submisi Assepol, hal 8.
631. Wawancara CAVR dengan Caetano Guterres, Dili, 22 Mei 2004.
632. Wawancara CAVR dengan Mário Nicolau Reis, Dili, 17 November 2002.
633. Wawancara CAVR dengan Caetano Guterres, Dili, 22 Mei 2004.
634. Kodam XVI Udayana, Korem 164/Wira Dharma, Prosedur Tetap (Protap) No. PROTAP/01-B/VII/1982 mengenai prosedur menginterogasi tahanan, tanggal Juli 1982
635. Wawancara CAVR dengan Aquelino Fraga Guterres, Baguia, Baucau, 17 Mei 2004.
636. Pernyataan HRVD 01265; 05157; 05169; 05156; 06681; 08182 dan 08187.
637. Pernyataan HRVD 5121.
638. Wawancara CAVR dengan Lucio Dinis Marques, Maliana, 14 Juni 2003.
639. Lihat daftar ke-45 korban – "Daftar Nama Korban Yang Dibantai Tahun 1984 di Bobonaro." Disediakan oleh Olandino Guterres, di Laporan Distrik Bobonaro (11-14 Juni 2003)
640. Pernyataan HRVD 7172; 8143; 6715; 7172; 7168; 5203 dan 3695.
641. Wawancara CAVR dengan Dinis de Araújo, Maliana, Bobonaro, 14 Juni 2003.
642. Pernyataan HRVD 1265.
643. Wawancara CAVR dengan Armando dos Santos, Maliana, Bobonaro, 14 Juni 2003.
644. Pernyataan HRVD 5751 dan 5817 (Aileu); Pernyataan HRVD 7233 dan 2803 (Ainaro); Pernyataan HRVD 7028; 7060; 7662; 7764; 7092; 7735 dan 2401 (Baucau); Pernyataan HRVD 6681 (Bobonaro); Pernyataan HRVD 1265; 5156 dan 5203 (Covalima); Pernyataan HRVD 3747; 3167; 5016 dan 3785 (Dili); Pernyataan HRVD 2142; 5356; 4433; 5333; 5393; 5394; 8726; 8754; 2797; 4439 dan 4459 (Lautém); Pernyataan HRVD 0902; 0922; 0932; 0981; 0992 dan 0993 (Liquiça); Pernyataan HRVD 6515; 1913; 1560 dan 3452 (Manatuto); Pernyataan HRVD 3080; 6798; 7331; 7515; 7465; 9180; 4123; 4163 dan 6037 (Viqueque).
645. Pernyataan HRVD 0922.
646. Pernyataan HRVD 9180.
647. Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 62 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
648. Pernyataan HRVD 7603.
649. Ibid.
650. Pernyataan HRVD 3338.
651. Pernyataan HRVD 5049.
652. Pernyataan HRVD 6987.
653. Pernyataan HRVD 0483.
654. Pernyataan HRVD 6235.
655. Pernyataan HRVD 4873. Lihat juga pernyataan HRVD 4874 di mana korban mengalami masa penahanan sewenang-wenang yang sama di Kodim Dili karena anggota Yonif 723 tidak percaya KTP yang ditemukan adalah miliknya.
656. Pernyataan-pernyataan HRVD 7213; 7220; 1012; 3334 dan 9175.
657. Pernyataan-pernyataan HRVD 3778; 5049; 6025; 4209; 4126 dan 4189.
658. CAVR, Wawancara dengan Januario Freitas Ximenes, Baucau, 3 September 2004.
659. CAVR, Wawancara dengan Mário Filipe, Baucau, 3 September 2004.
660. CAVR, Wawancara dengan David da Conceição Thon, ditahan di penjara Becora tahun 1991, Dili, 13 Agustus 2004; CAVR, Wawancara dengan Dominggos Martins Pereira, Aileu, 15 Oktober 2004.
661. CAVR, Wawancara dengan Octavio da Conceição, Dili, 3 November 2002.
662. CAVR, Wawancara dengan Eduardo Lopes, ditahan di LP Maliana antara tahun 1995-1999, Maliana, 28 Agustus 2004.
663. Ibid.
664. CAVR, Wawancara dengan José da Costa Ximenes (ditahan di LP Buruma, Baucau on 10 Juli 1994), Baucau, 3 September 2004.

665. CAVR, Wawancara dengan Felismina da Conceição, (ditahan di penjara Becora tahun 1992), Dili, 4 Mei 2004.
666. CAVR, Wawancara dengan Julio Araújo Martins, Gleno, Ermera, 26 Agustus 2004.
667. CAVR, Wawancara dengan Jacinto Alves dan Gregório Saldanha, Dili, 4 Juni 2004. Keduanya ditahan di penjara Becora tahun 1992.
668. CAVR, Wawancara dengan Felismina da Conceição, (ditahan di penjara Becora tahun 1992), Dili, 4 Mei 2004.
669. CAVR, Wawancara dengan David da Conceição Thon, Dili, 13 Agustus 2004. (David ditahan di gedung SGI di Colmera tahun 1988).
670. CAVR, Profil Komunitas Desa Darulete, Subdistrik Liquiça, Distrik Liquiça, 13 Februari 2003, menyebut 15 orang ditahan.
671. CAVR, Profil Komunitas Desa Darulete, Subdistrik Liquiça, Distrik Liquiça, 13 Februari 2003; Pernyataan-pernyataan HRVD 0907; 2989; 1985 dan 2874.
672. Interogasi oleh SGI: Pernyataan HRVD 2989. Interogasi di Koramil Liquiça yang digambarkan di CAVR, Profil Komunitas Desa Loidahar, Subdistrik Liquiça, Distrik Liquiça, 4 Maret 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Lukulai, Subdistrik Liquiça, Distrik Liquiça, 19 Februari 2003; dan Pernyataan HRVD 1985.
673. CAVR, Profil Komunitas Desa Lukulai, Subdistrik Liquiça, Distrik Liquiça, 19 Februari 2003; CAVR, Profil Komunitas Subdistrik Bazarete, Distrik Liquiça; Pernyataan HRVD 1985.
674. Submisi Elsam kepada CAVR menyatakan bahwa Gadapaksi dibentuk sekitar Maret 1994, dan Laporan Geoffrey Robinson menyatakan bahwa Gadapaksi dibentuk Juli 1995 (hal. 154).
675. Pernyataan HRVD 2874.
676. CAVR, Wawancara dengan José da Silva Amaral, Afalocai, Uato Carbau, Viqueque, 18 September 2003.
677. Amnesty International, Statement to the UN Committee on Decolonisation, ASA 21/14/91, Agustus 1991.
678. CAVR, Profil Komunitas Subdistrik Soibada, Distrik Manatuto, 22 September 2003; Pernyataan HRVD 4779 (40 orang) Paulo da Costa dan 4790 (46 orang).
679. Pernyataan HRVD 4779.
680. CAVR, Profil Komunitas Desa Vatuvou, Subdistrik Maubara, Distrik Liquiça, 26 Juni 2003 dan Pernyataan HRVD 1996.
681. CAVR, Profil Komunitas Desa Vatuvou, Subdistrik Maubara, Distrik Liquiça, 26 Juli 2003, Pernyataan HRVD 3004; 5892; 2994; 5882; dan 1996; Amnesty International, Indonesia dan East Timor: Twenty years of violations: statement before the United Nations Committee on Decolonization, 11 July 1995, AI Index: ASA 21/33/95 (Amnesty International, Indonesia dan Timor Timur: Dua puluh tahun Kekerasan; pernyataan di hadapan Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi, 11 Juli 1995 AI Index: ASA 21/33/95).
682. Pernyataan HRVD 1996.
683. CAVR, Profil Komunitas Desa Vatuboro, Subdistrik Maubara, Distrik Liquiça, 5 Juni 2003, Pernyataan-pernyataan HRVD 5882 dan 1996.
684. Pernyataan HRVD 6739.
685. Pernyataan HRVD 8098
686. CAVR, Wawancara dengan Chiquito da Costa Guterres (alias Michael Savio, alias Kaiwua), Dili, 14 Juni 2004.
687. Amnesty International, Indonesia/East Timor: Possible "disappearance", 4 July 1991, AI Index: ASA 21/12/91; Amnesty International, Extrajudicial Execution/Arrest/Fear of Torture, 30 Oktober 1991, AI Index: ASA 21/18/91.
688. Amnesty International, Legal Concern/Fear of Torture, 22 November 1991, AI Index: ASA 21/26/91.
689. Amnesty International, Further information on UA 408/91 (ASA 21/26/91, 22 November 1991) and follow-up ASA 21/28/91, 29 November 1991 - Legal Concern/Fear of Torture, 10 December 1991, AI Index: ASA 21/29/91.
690. Amnesty International Statement to the UN Committee on Decolonisation, ASA 21/14/91, August 1991.
691. Wawancara CAVR dengan José António de Jesus das Neves, Dili, 3 Mei 2004.

692. Constâncio Pinto and Matthew Jardine, *East Timor's unfinished struggle, inside the Timorese Resistance*, 1997, South End Press, Boston, MA, p.108
693. CAVR, Wawancara dengan Gregório Saldanha, Dili, 10 November 2002.
694. CAVR, Wawancara dengan, José Manuel da Silva Fernandes, Dili, 31 Oktober 2002.
695. Ibid. Lihat juga CAVR, Kesaksian Gregório Saldanha kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003.
696. Kodam IX Kolakops, Rencana Operasi "Halo Kapaz," tertanggal 31 Agustus 1991, Rahasia, dikutip dalam Samuel Moore, "The Indonesian Military's Last Years in East Timor: An Analysis of its Secret Documents," *Indonesia* 72, October 2001), p. 21.
697. CAVR, Wawancara dengan Alfonso Maria, Dili, 1 November 2002
698. Pernyataan HRVD 1970.
699. Pernyataan HRVD 1970. Jorge tidak menceritakan kepada Komisi nasib rekan-rekannya Calistro dan Amadeo.
700. Pernyataan HRVD 5070.
701. CAVR, Wawancara dengan David da Conceição, Dili, 13 Agustus 2004.
702. Amnesty International, Urgent Action 04/92, AI Index: ASA 21/01/92, 3 Januari 1992.
703. Pernyataan HRVD 5070.
704. CAVR, Wawancara dengan, José Manuel da Silva Fernandes, Dili, 31 Oktober 2002.
705. Pernyataan HRVD 8046.
706. Pernyataan HRVD 8088.
707. CAVR, Wawancara Rahasia, oleh sumber yang tidak mau disebut namanya, Dili, 15 November 2004.
708. Pernyataan HRVD 5070.
709. CAVR, Wawancara dengan José Manuel da Silva Fernandes, Dili, 20 Desember 2004.
710. Constâncio Pinto dan Matthew Jardine, *East Timor's unfinished struggle, inside the Timorese struggle*, 1997, South End Press, Boston, MA, hal. 112.
711. Amnesty International, *East Timor: Short-Term Detention and Ill-treatment*, AI index: ASA 21/01/90.
712. Pernyataan HRVD 8084-4.
713. Pernyataan-pernyataan HRVD 2989; 8384-4 dan 8304.
714. Pernyataan HRVD 0195.
715. Pernyataan-pernyataan HRVD 2726; 6731; 7157; 7420; 5071; 9126; 6352; 0921; 4169; 4217-3; 9126; 7736; 4705; 0195-4; 1996 dan 0634.
716. Lihat kesaksian-kesaksian Simplicio Celestino de Deus kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, Dili, 28-29 November 2003, dan Alexandrino da Costa kepada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Anak dan Konflik, Dili, 28-29 Maret 2004.
717. Pernyataan-pernyataan HRVD 6731, 7157 dan 4217-3; Wawancara CAVR dengan Simplicio Celestino de Deus, Dili, 8 Oktober 2004.
718. Pernyataan HRVD 5071.
719. CAVR, Wawancara dengan, José Manuel da Silva Fernandes, Dili, 31 Oktober 2002.
720. Amnesty International, *Indonesia / East Timor: A new order? Human rights in 1992*.
721. Pernyataan HRVD 2726.
722. CAVR, Wawancara dengan Simplicio Celestino de Deus, Dili, 5 Desember 2003.
723. Penangkapan di Liquiça, lihat sebagai contoh Pernyataan-pernyataan HRVD 0634; 0195; 1996 dan 4705 (Mereka yang ditahan oleh kepala intelijen Duranto dan Tome Diogo). Untuk penahanan di Bobonaro, lihat sebagai contoh Pernyataan-pernyataan HRVD 8634 dan 5615-2. Untuk penahanan di Baucau, lihat sebagai contoh Pernyataan HRVD 2363-4 dan wawancara Neil Barrett dengan Saturnino Belo (*tape* 5), Dili sebagai bagian dari Proyek Video Neil Barret (tentang Comarca Balide) diberikan sebagai submisi kepada CAVR.
724. CAVR, Profil Komunitas Desa Uma-Anaico dan Desa Uma-Analu, Subdistrik Venilale, Distrik Baucau, 12 Juni 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Tasi, Subdistrik Vemasse, Distrik Baucau, 28 Maret 2003.
725. CAVR, Profil Komunitas Desa Uatu-Haco, Subdistrik Venilale, Distrik Baucau, 8 Juli 2003.
726. CAVR, Profil Komunitas Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, tanpa tanggal.

727. CAVR, Wawancara dengan Simplicio Celestino de Deus, Dili, 5 Desember 2003.
728. Asia Watch, *Remembering History in East-Timor, the trial of Xanana Gusmão and a follow-up to the Dili Massacre*, April 1993, Vol.5, No.8, hal. 22.
729. Ibid, hal. 23.
730. CAVR, Wawancara dengan Simplicio Celestino de Deus, Kantor Bea Cukai, Dili, 5 Desember 2003.
731. Untuk penangkapan sehubungan dengan kunjungan di Ainaro, lihat bagian mengenai Tim Sukarelawan yang dibentuk untuk menghalangi persiapan kunjungan tersebut.
732. CAVR, Wawancara dengan, Adriano João, Dili, 10 Juni 2004
733. CAVR, Wawancara dengan Julio Araújo Martins, Gleno, Ermera, 26 Agustus 2004.
734. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), *Kerangka Pencarian dan Pengumpulan Data Operasi Militer ABRI di Wilayah Timor Timur: Periode 1974-1999*, Jakarta, Maret 2001. Komisi mendengar beberapa kasus di mana orang-orang direkrut paksa ke dalam tim-tim ini, lihat sebagai contoh Pernyataan HRVD 0745.
735. Pernyataan-pernyataan HRVD 1887; 1106; 1172; 1115 dan 1108.
736. CAVR, Profil Komunitas Desa Atabai, Subdistrik Atabae, Distrik Bobonaro, 8 Oktober 2002.
737. Pernyataan HRVD 1115.
738. Pernyataan HRVD 1106.
739. Pernyataan HRVD 1140.
740. CAVR, Profil Komunitas Desa Atabai, Subdistrik Atabae, Distrik Bobonaro, 8 Oktober 2002.
741. CAVR, Profil Komunitas Desa Manetu, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 8 July 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Horai Kiik, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 24 Juli 2003.
742. CAVR, Profil-profil Komunitas Desa Maulau (26 Mei 2003), Desa Manelobas (23 Mei 2003), dan desa Manetu (8 Juli 2003), Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro.
743. CAVR, Profil Komunitas Desa Manutassi, Subdistrik Ainaro, Distrik Ainaro, 17 Februari 2003.
744. CAVR, Profil Komunitas Desa Maulau, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 26 Mei 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Manelobas, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 23 Mei 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Manetu, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 8 Juli 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Cassa, Subdistrik Ainaro, Distrik Ainaro, 18 Februari 2003.
745. Pernyataan HRVD 2682.
746. CAVR, Profil Komunitas Desa Maulau, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 26 Mei 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Manelobas, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 23 Mei 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Manetu, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 8 Juli 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Cassa, Subdistrik Ainaro, Distrik Ainaro, 18 Februari 2003.
747. CAVR, Profil Komunitas Desa Manetu, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 8 Juli 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Manutasi, Subdistrik Ainaro, Distrik Ainaro, 17 Februari 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Cassa, Subdistrik Ainaro, Distrik Ainaro, 18 Februari 2003.
748. Pernyataan HRVD 2683.
749. Pernyataan HRVD 3379.
750. Pernyataan-pernyataan HRVD 3309; 3342; 4911; 5956; 5006; 3378; 3386; 3387; 3389; 4919; 4930; 5971; 3307; 4983; 5000; 5977; 3379; 3383; 4950; 4964; 5003 dan 4921; CAVR Profil Komunitas Desa Manelobas, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 23 Mei 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Manetu, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 8 Juli 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Maubisse, Subdistrik Maubisse, Distrik, Ainaro.
751. CAVR, Profil Komunitas Desa Ainaro, Subdistrik Ainaro, Distrik Ainaro; CAVR, Profil Komunitas Desa Maubisse, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, semuanya berlangsung pada Mei - Juli 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Manetu, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 8 Juli 2003.
752. CAVR, Profil Komunitas Desa Ainaro, Subdistrik Ainaro, Distrik Ainaro; CAVR, Profil Komunitas Desa Maubisse, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, semua berlangsung pada Mei - Juli 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Manetu, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 8 Juli 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Manutassi, Subdistrik Ainaro, Distrik Ainaro, 17 Februari 2003.
753. CAVR, Profil Komunitas Desa Horai Kiik, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, 24 Juli 2003.
754. CAVR, Wawancara dengan José Manuel da Silva Fernandes, Dili, 31 Oktober 2002, Assepol (Associação dos Ex-Prisioneiros Políticos), *Political Prisoners in East Timor 25 April 1974—September 1999*, Submisi kepada CAVR, 17 Februari 2003.

755. Submisi Assepol (17 Februari 2003), dikonfirmasi dalam wawancara CAVR dengan José Manuel da Silva Fernandes, Dili, 20 Desember 2004.
756. Ibid.
757. CAVR, Wawancara dengan José Manuel da Silva Fernandes, Dili, 20 Desember 2004.
758. Ibid.
759. Pernyataan HRVD 7157.
760. CAVR, Wawancara dengan Francisco Miranda Branco, Dili, 24 November 2002; CAVR, Wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Juni 2005.
761. Pernyataan HRVD 7420.
762. Pernyataan HRVD 0921.
763. Pernyataan HRVD 9126.
764. Pernyataan HRVD 5071.
765. Pernyataan HRVD 7736.
766. Ben Anderson, Douglas Kammen dan Arif Djati, Wawancara dengan Mário Carrascalão, Dili, 20 Maret 2002. (Arsip CAVR).
767. CAVR, Wawancara dengan José Manuel da Silva Fernandes, Dili, 20 Desember 2004.
768. CAVR, Wawancara dengan Gregório Saldanha, Dili, 4 Juni 2004.
769. CAVR, Wawancara dengan João Freitas da Camara, Palacio da Governo, Dili, 5 Juni 2004.
770. CAVR, Wawancara dengan Virgilio da Silva Guterres, Dili, 5 November 2002.
771. CAVR, Wawancara dengan Dominggos Barreto, Dili, 6 Mei 2004.
772. CAVR, Wawancara dengan Virgilio da Silva Guterres, Dili, 5 November 2002. CAVR, Wawancara dengan João Freitas da Camara, Palácio da Governo, Dili, 5 Juni 2004.
773. CAVR, Profil Komunitas Desa Florestal, Subdistrik Nain Feto/Dili Oriental, Distrik Dili, 12 Juni 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Nazare, Subdistrik Nain Feto/Dili Oriental, Distrik Dili, 9 Maret 2003; Pernyataan-pernyataan HRVD 3076-8; 5066; 5674; 9189 dan 6982-2.
774. AFP, Jakarta, 12 Juli 1994.
775. Pernyataan HRVD 5066.
776. Pernyataan-pernyataan HRVD 5674 dan 6982-2.
777. Laporan tahunan ETHRC 17 Februari 1998, <http://www.asia-pacific-action.org/southeastasia/easttimor/resources/reports/ethrc97.htm>
778. Amnesty International ASA 21/86/97, ASA 21/88/97, laporan tahunan ETHRC 17 Februari 1998, <http://www.asia-pacific-action.org/southeastasia/easttimor/resources/reports/ethrc97.htm>
779. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Kerangka Pencarian dan Pengumpulan Data Operasi Militer ABRRI di Wilayah Timor Timur: Periode 1974-1999, Jakarta, Maret 2001. Submisi kepada CAVR.
780. Pernyataan-pernyataan HRVD 7530 dan 7465.
781. Pernyataan HRVD 8177.
782. Pernyataan HRVD 8177.
783. CAVR, Wawancara dengan Hernani Deolindo de Araújo, Maliana, 28 Agustus 2004.
784. CAVR, Wawancara dengan Eduardo Lopes (Lorico Lopes), Maliana, 28 Agustus 2004.
785. Pernyataan HRVD 2436.
786. CAVR, Profil Komunitas Desa Macadique, Subdistrik Uatolari, Distrik Viqueque; Amnesty International, 1997 Indonesia/East Timor: Further information on fear of torture / medical concern, AI Index: ASA 21/06/97, 14 Februari 1997 (Amnesty Internasional, 1997 Indonesia/Timor Timur: Informasi lebih lanjut mengenai ketakutan akan penyiksaan/keprihatinan medis, AI Index: ASA 21/06/97, 14 Februari 1997).
787. Amnesty International, 1997 Indonesia/East Timor: Further information on fear of torture / medical concern, AI Index: ASA 21/06/97, 14 Februari 1997 (Amnesty Internasional, 1997 Indonesia/Timor Timur: Informasi lebih lanjut mengenai ketakutan akan penyiksaan/keprihatinan medis, AI Index: ASA 21/06/97, 14 Februari 1997).
788. Ditahan di Polres: Balthasar SH Belo (Amnesty International, Indonesia: Fear of torture, AI Index: ASA 21/01/97, 8 Januari 1997); Ditahan di Polda: José Maria Geronimo, João Budiono C Moraes, Gregório Sequira, Luis Afonso, Abel Fernandes dan Bobby Xavier (Amnesty International, Indonesia:

- Fear of torture, AI Index: ASA 21/01/97, 8 Januari 1997). Detained in SGI Colmera: Armanda C Soares (Amnesty International, Indonesia: Fear of torture, AI Index: ASA 21/01/97, 8 Januari 1997); Ditahan di Penjara Becora: Pernyataan HRVD 5075, CAVR, Profil Komunitas Desa Bidau Santana dan Meti Aut, Subdistrik Nain Feto/Dili Oriental, District Dili, 1 September 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Hera, Subdistrik Cristo Rei/Dili Oriental, Distrik Dili, 1 September 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Benamauk, Kamea dan Fatu-Ahi, Subdistrik Cristo Rei, Distrik Dili [tanpa tanggal]; Amnesty International, Indonesia: Further Information on fear of torture, AI Index: ASA 21/16/97, 18 Maret 1997.
789. Amnesty International, Indonesia: Fear of torture, AI Index: ASA 21/01/97, 8 Januari 1997).
790. Pernyataan HRVD 3739.
791. Amnesty International, *Intimidation/Fear for Safety: 29 Abducted by "Ninja" Gangs in Dili 13 February 1995*, AI Index: ASA 21/14/95.
792. Amnesty International, *Indonesia and East Timor: Political prisoners and the "rule of law"*, AI Index: ASA 21/16/95. (*Indonesia dan Timor Timur: Tahanan Politik dan "supremasi hukum"*, AI Index: ASA 21/16/95).
793. Reuters 21 Februari 1995.
794. Pernyataan HRVD 8069-6.
795. Pernyataan HRVD 8069.
796. Pernyataan HRVD 9082.
797. *Buletin Tapol*, No. 102, Desember 1990, hal 16.
798. Pernyataan-pernyataan HRVD 2698; 3342; 9321 dan 2687, 5719; 0076-8, 3120; 0445-7&8; 3139-4; 7375-2 dan 6741.
799. Pernyataan HRVD 1346; 2698; 3342; 9321 dan 2687.
800. Lihat John G Taylor, *East Timor: The Price of Freedom*, London: Zed Books, 1999, hal. 220.
801. Pernyataan HRVD 2687.
802. Pernyataan HRVD 2006.
803. Pernyataan HRVD 7375-2.
804. Pernyataan-pernyataan HRVD 5719; 0076 dan 6983.
805. Pernyataan HRVD 5768.
806. Pernyataan HRVD 6269.
807. Pernyataan-pernyataan HRVD 3139-4 dan 3076-9.
808. Pernyataan-pernyataan HRVD 4736 dan 4733
809. Pernyataan HRVD 4733.
810. Pernyataan-pernyataan HRVD 4173-3; 4169-3 dan 4137.
811. Pernyataan-pernyataan HRVD 0154-3; 8006; 3123-6 dan 7681.
812. CAVR, Profil Komunitas Desa Bualale, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 16 Desember 2003.
813. Pernyataan HRVD 9321.
814. Asia Watch, "Remembering History in East Timor: The Trial of Xanana Gusmão and a Follow-up to the Dili Massacre", Vol. 5 No. 8, April 1993, hal. 8
815. CAVR, Wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, h. 1.
816. CAVR, Wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, h. 5.
817. Amnesty International, *East Timor: Xanana Gusmão—A Briefing*, AI Index: ASA/21/58/97, August 1997.
818. Commission on Human Rights, Forty-Ninth Session, "Situation in East Timor: Report of the Secretary-General", 10 Februari 1993, hal. 14.
819. Ibid.
820. Assepol (Associação dos Ex-Prisioneiros Políticos, Asosiasi Bekas Tahanan Politik), Political Prisoners in East Timor 25 April 1974-September 1999, Submisi kepada CAVR, 18 Februari 2003, hal. 11.
821. Asia Watch, "Remembering History in East Timor: The Trial of Xanana Gusmão and a Follow-up to the Dili Massacre", Vol. 5 No. 8, April 1993, h. 9.
822. Ibid., h. 10.
823. CAVR, Wawancara dengan Armandina Gusmão, Dili, 3 September 2004.
824. CAVR, Wawancara dengan Afonso Maria, Dili, 1 November 2002.

825. Pernyataan HRVD 3120. Lihat juga Pernyataan-pernyataan HRVD 3127, 7375 0445-7 dan 8 dan 3139-4 untuk penangkapan di daerah Ossu pada tahun 1992.
826. CAVR, Wawancara dengan Olga Corte-Real, Datina, Same, Manufahi, 3 Juni 2003.
827. Pernyataan-pernyataan HRVD 4005; 4385 (1985) 4009; 7584 (1986) dan 4075 Manufahi (1987).
828. Pernyataan HRVD 7091.
829. Pernyataan-pernyataan HRVD 8375 dan 8342.
830. Pernyataan HRVD 8342.
831. Pernyataan HRVD 8342.
832. Pernyataan HRVD 8342.
833. Pernyataan HRVD 8375.
834. CAVR, Wawancara dengan Reinaldo Marcal, Dili, 10 Juli 2004.
835. Human Rights Watch, *Deteriorating Human Rights Situation in East Timor*, CAVR Archives at HRW East Timor\reports\1997\indtimor\index.html.
836. CAVR, Wawancara dengan Francisco da Costa, Dili, 7 Mei 2004.
837. Amnesty International menyebutkan orang-orang lain yang ditangkap: José Acacio, João Angelo, Francisco Magno. AI Index: ASA 21/38/97.
838. ETHRC, Urgent Action, 4 Juni 1997, Amnesty International, Urgent Action, 2 Juni 1997.
839. Pernyataan HRVD 8005.
840. CAVR, Wawancara dengan Reinaldo Marcal, Dili, 10 Juli 2004.
841. Pernyataan HRVD 8005.
842. Pernyataan HRVD 5074, Romeo da Conceição (In Pernyataan HRVD, tertanggal 31 Juli, tapi sangat jelas dari konteksnya bahwa tanggal 31 Mei.)
843. CAVR, Wawancara dengan Mariano da Costa Sarmento Soares, Dili, 10 Juli 2004.
844. CAVR, Wawancara dengan Reinaldo Marcal, Fatumeta, 10 Juli 2004.
845. Ibid. dan Wawancara dengan Mariano da Costa Sarmento Soares, Dili, 4 Mei 2004 dan 10 Juli 2004.
846. Ibid.
847. CAVR, Wawancara dengan Reinaldo Marcal, Fatumeta, Dili, 10 Juli 2004, CAVR, Wawancara dengan Mariano da Costa Sarmento Soares, Dili, 10 Juli 2004.
848. CAVR, Wawancara dengan Vasco da Gama, Becora, Dili, 18 Mei 2004, CAVR, Wawancara dengan Luis Maria da Silva (Maukiak), Dili, 16 Desember 2003, CAVR, Wawancara dengan, Francisco da Costa, Dili, 7 Mei 2004.
849. Pernyataan HRVD 7815 dan 7783; CAVR, Profil Komunitas Desa Bualale, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 16 Desember 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Guruca, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 21 November 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Uaitame, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 12 Desember 2003; CAVR, Profil Komunitas Desa Lelalai, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 20 Oktober 2003.
850. Pernyataan HRVD 7783.
851. CAVR, Wawancara dengan Vasco da Gama, Becora, Dili, 18 Mei 2004, CAVR, Wawancara dengan Luis Maria da Silva (Maukiak), Dili, 16 Desember 2003, CAVR, Wawancara dengan Francisco da Costa, Dili, 7 Mei 2004, Pernyataan HRVD 7707; 7098 dan 3702.
852. CAVR, Wawancara CAVR dengan Francisco da Costa, Dili, 7 Mei 2004.
853. CAVR, Wawancara dengan João Bosco, Quelicai, 2 September 2004.
854. HRVD Pernyataan 8046.
855. CAVR, Wawancara dengan Mário Filipe, Baucau, 2 September 2004.
856. CAVR, Wawancara dengan Vasco da Gama, Becora, Dili, 18 Mei 2004.
857. CAVR, Wawancara dengan Mário Filipe, Baucau, 2 September 2004.
858. CAVR, Wawancara dengan Francisco da Costa, Dili, 7 Mei 2004.
859. CAVR, Wawancara dengan Francisco da Costa, Dili, 7 Mei 2004.
860. CAVR, Wawancara dengan Luis Maria da Silva (Maukiak), Dili, 16 Desember 2003.
861. CAVR, Wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
862. Ibid.
863. CAVR, Wawancara dengan Constâncio da Costa Santos, Balide, Dili, 7 Juli 2004.

864. CAVR, Profil Komunitas Desa Maumeta, Subdistrik Bazartete, Distrik Liquiça; Pernyataan-pernyataan HRVD 1974; 1987 dan 1984.
865. Pernyataan HRVD 1974.
866. Pernyataan HRVD 1987.
867. Pernyataan HRVD 1984.
868. Pernyataan HRVD 1984.
869. Ibid.
870. Pernyataan-pernyataan HRVD 3446; 3472 dan 1558.
871. Pernyataan HRVD 3446.
872. Pernyataan HRVD 3472.
873. Pernyataan-pernyataan HRVD 3472; 1558 dan 3446.
874. Pernyataan-pernyataan HRVD 1531; 9019; 1566
875. Pernyataan HRVD 9033.
876. Pernyataan-pernyataan HRVD 1581; 1586; 1580; 1575; 1601; 1602; 1558; 1510; 1568; 1550; 1526; 1589; 1530; 1549; 1557; 1521 dan 1531.
877. Pernyataan HRVD 1558.
878. Pernyataan-pernyataan HRVD 1550; 1526 dan 1589. Menurut Pernyataan HRVD 1526, kepala desa; menurut Pernyataan HRVD 1589, seorang komandan Ablai. Sangat mungkin orang yang sama memegang dua posisi.
879. Pernyataan-pernyataan HRVD 1526; 1530; 1549; 1557 dan 1575.
880. Pernyataan HRVD 1526.
881. Pernyataan HRVD 1557.
882. Pernyataan HRVD 1521.
883. Pernyataan-pernyataan HRVD 1526 dan 1550.
884. Pernyataan -pernyataan HRVD 1549; 1530; 1557; 1580; dan 1531.
885. Pernyataan -pernyataan HRVD 8124 dan 1549.
886. Pernyataan HRVD 1549.
887. Pernyataan HRVD 8124.
888. Untuk penyebutan nama-nama anggota Koramil, lihat Pernyataan HRVD 1505; 1518; 1520; 1540; 1559 dan 9022. Untuk kepala seksi intelijen T434, lihat Pernyataan-pernyataan HRVD 3407; 3436 dan 3437.
889. Pernyataan-pernyataan HRVD 1568 dan 1523.
890. Pernyataan-pernyataan HRVD 1505; 1518; 3467 dan 4029.
891. Pernyataan HRVD 1507.
892. Pernyataan-pernyataan HRVD 1510, 1514; 1559 dan 3437.
893. Pernyataan-pernyataan HRVD 1540 dan 1514.
894. Pernyataan HRVD 1514.
895. Ibid.
896. Koramil Alas: lihat Pernyataan-pernyataan HRVD 1505; 1518; 1573; 1593 dan 3480; Pos Nanggala Alas: lihat Pernyataan-pernyataan HRVD 1564 dan 3473; Pos polisi: lihat Pernyataan-pernyataan HRVD 1507 dan 3436; Rumah pribadi: lihat Pernyataan-pernyataan HRVD 9015 dan 1541.
897. Pernyataan HRVD 1559.
898. Pernyataan HRVD 1568.
899. Pernyataan HRVD 9022.
900. Pernyataan HRVD 6861
901. Pernyataan HRVD 1079
902. Pernyataan HRVD 2645; 5298; 5922; 3515; 8405; 5934; 4633; 5789; 5794; 4191.
903. Pernyataan HRVD 8046.
904. Pernyataan HRVD 3245; 2019; 5602; 1021; 6887.
905. Pernyataan HRVD 3245.
906. Pernyataan HRVD 5602.

907. Pernyataan-pernyataan HRVD 03691; 3692; 02543, 01866; 2637; 0804; 5133; 8619; 0093; 5492; 0929; 3298; 5592; 2681; 5133; 3691, 2021, 3679, 5151, 3690, 3692, 8893; 1866; CAVR, Profil Komunitas Desa Saboria, Subdistrik Aileu kota, Distrik Aileu, 14 Maret 2003.
908. Pernyataan HRVD 5133; 8619; 0093; 5492; 0929; 3298; 5592; 2681.
909. Pernyataan-pernyataan HRVD 2637; 0804.
910. Pernyataan HRVD 5133.
911. CAVR, Profil Komunitas Desa Saboria, Subdistrik Aileu kota, Distrik Aileu, 14 Maret 2003.
912. CAVR, Profil Komunitas Desa Saboria, Subdistrik Aileu kota, Distrik Aileu, 14 Maret 2003.
913. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004. hal.201-205.
914. Pernyataan-pernyataan HRVD 5888; 9158.
915. Informasi diperoleh dari Dave Savage dalam sebuah surat elektronik CAVR, pada tanggal 2 November 2004.
916. Pernyataan-pernyataan HRVD 7134, 6277, 6349, 6348.
917. Pernyataan HRVD 6348.
918. Pernyataan HRVD 1179.
919. Pernyataan HRVD 8221.
920. Pernyataan HRVD 6631.
921. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 169.
922. CAVR, Profil Komunitas Aldeia Rainaba, Desa Gugleur, Subdistrik Maubara, Distrik Liquiça, 12 Juni 2003.
923. Pernyataan HRVD 04697; 4610; 4615; 4638; 5855; 5920 (Gugleur); Pernyataan HRVD 4642; 4659; 4689; 4608; 4654 (Vatuboro); 5908; 5909; 5934; 5943; 5908; 5909; 5943 (Vatuvou); 4666; 4646; 4613; 4622; 4651; 4629; SR1/99-43 (Guico).
924. Pernyataan HRVD SR2/98 (ETHRC).
925. Pernyataan HRVD SR1/99-63.
926. Pernyataan HRVD 05168.
927. Pernyataan HRVD 5908.
928. Pernyataan HRVD 6260.
929. Pernyataan-pernyataan HRVD 5133, 04628, 02934, 04920, 1954, 3670, 3692.
930. Pernyataan HRVD 5133.
931. CAVR, Profil Komunitas Desa Rai Fun, Subdistrik Maliana, Distrik Bobonaro, 3 Februari 2003.
932. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 189.
933. Pernyataan HRVD 0408.
934. Pernyataan HRVD 0411.
935. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004 hal.144.
936. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004 hal.144.
937. Pernyataan HRVD 3692.
938. Pernyataan-pernyataan HRVD 8495; 7418; 1233; 3582; 0643; 4986.
939. Pernyataan-pernyataan HRVD 3858; 8162; 2036; 0225; 1204.
940. Pernyataan-pernyataan HRVD 6396; 6912.
941. Pernyataan HRVD 1554.
942. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 149, lihat juga Dakwaan Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat terhadap Sedyono et al., (Kasus Nomor 14-2003) 7 April 2003.
943. Pernyataan-pernyataan HRVD 3690, 3699.
944. Pernyataan-pernyataan HRVD 3691, 2021, 3679, 3699, 3670, 5138, 3688, 8893, 7419, 3698, 5151 dan CAVR, Profil Komunitas Aldeia Zobete, Desa Fatuleto, Subdistrik Zumalai, Distrik Covalima, 21 Mei 2003.
945. Pernyataan-pernyataan HRVD 5152, 7419, 2021, 7422, 3670, 5130, 3698, 3690.
946. Pernyataan-pernyataan HRVD 3691, 2021, 3679, 5151, 3690, 3692, 8893.
947. Pernyataan HRVD 2976.
948. Pernyataan HRVD 4644.
949. Pernyataan HRVD 0276-1.

950. CAVR, Profil Komunitas Desa Loidahar, Subdistrik Liquiça, Distrik Liquiça, 4 Maret 2003.
951. Submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 169, April 2004.
952. Pernyataan-pernyataan HRVD 4644; 5865; 4633; 5884; 5903.
953. Pernyataan-pernyataan HRVD 3509; 2103.
954. Pernyataan-pernyataan HRVD 9025; 9027.
955. Pernyataan HRVD 6157.
956. Ibid.
957. Pernyataan-pernyataan HRVD 2193; 2224
958. Pernyataan HRVD 2193
959. Ibid.
960. Pernyataan HRVD 3578.
961. Pernyataan-pernyataan HRVD 4594; 4544.
962. Pernyataan HRVD 6174.
963. Pernyataan HRVD 4594. Lihat juga Pernyataan HRVD 4544.
964. Pernyataan-pernyataan HRVD 8295; 8296.
965. Pernyataan-pernyataan HRVD 3510-2; 8295; 8296-8; 9471-10.
966. Pernyataan HRVD 6401.
967. Pernyataan HRVD 8296.
968. Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat, Dakwaan terhadap Vasco da Cruz, Domingos Alves, Guilhermino de Araújo, Napoleão dos Santos, Simão Tasion, Lino Barreto dan Cancio Lopes de Carvalho, 29 November 2004, di hal. 6.
969. Pernyataan HRVD 3670.
970. Pernyataan-pernyataan HRVD 5177; 5155; 3699; 5151; 5148.
971. Pernyataan HRVD 5155.
972. Pernyataan HRVD 7399.
973. Pernyataan HRVD 5535.
974. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 198. Dakwaan Wakil Jaksa Agung Timor-Leste untuk Kejahatan Berat terhadap Burhanuddin Siagian (Kasus nomor 2-2003) 3 Februari 2003.
975. Pernyataan-pernyataan HRVD 4321; 5532; 5535.
976. Pernyataan-pernyataan HRVD 4281; 4341.
977. Pernyataan-pernyataan HRVD 4321; 4281; 4341; 5532; 5535; 4235. Dakwaan Wakil Jaksa Agung Timor-Leste untuk Kejahatan Berat terhadap Burhanuddin Siagian (Kasus nomor 2-2003) 3 Februari 2003.
978. Pernyataan-pernyataan HRVD 8992, 5626.
979. Pernyataan HRVD 2930, CAVR, Profil Komunitas Desa Abani, Subdistrik Passabe, Distrik Oecussi, 10 September 2003.
980. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004 p.184,
981. Pernyataan HRVD 0354.
982. Pernyataan-pernyataan HRVD 2930; 6888; 2852; 6895; 0326; 0378; 0401; 2931; 2622; 2921; 2622; 2935; 2947; 6832; 6840; 6899; 6898; 6890; 6897; 2934; 2848; 2957; 2950; 2953; 2930 2936; 6884; 2851; 6837; 6892.
983. Pernyataan-pernyataan HRVD 0337, 9183, 0093; 2857.
984. Pernyataan-pernyataan HRVD 2852; 6888; 0336; 2614; 2957; 2637; 2852; 2950; 2947.
985. Pernyataan-pernyataan HRVD 2921; 2935; 2947; 2934; 2950; 2930.
986. Pernyataan-pernyataan HRVD 6890; 6897; 2848; 2936; 6884; 2851; 6837
987. Pernyataan-pernyataan HRVD 6892; 6898; 6840; 6832.
988. Pernyataan-pernyataan HRVD 2851; 6892.
989. CAVR, Profil Komunitas Desa Abani, Subdistrik Passabe, Profil Komunitas Desa Abani, Subdistrik Passabe, Distrik Oecussi, 10 September 2003.
990. Pernyataan-pernyataan HRVD 2931; 2622; 2921; 2935; 2934; 2957; 2950.
991. Pernyataan-pernyataan HRVD 6832; 6888; 6895; 6899; 6897; 6892; 6837; 2851.
992. Pernyataan-pernyataan HRVD 6888; 2852; 6899.

993. Pernyataan-pernyataan HRVD 2953; 2950; 2930; 6899; 2957.
994. Pernyataan-pernyataan HRVD 6888; 2848; 6892; 6837; 2930.
995. Pernyataan HRVD 0354.
996. Pernyataan HRVD 4661.
997. Pernyataan-pernyataan HRVD 5736; 5726.
998. Amnesty International, *Indonesia (East Timor): Further information on Fear for Safety*, AI Index: ASA 21/35/99, 26 April 1999.
999. Pernyataan-pernyataan HRVD 3757; 0615; 6952.
1000. CAVR, Profil Komunitas Desa Ahic, Subdistrik Lacluta, Distrik Viqueque, 22 November 2002.
1001. Pernyataan HRVD 0469.
1002. Pernyataan-pernyataan HRVD 0471; 0404.
1003. Pernyataan HRVD 0471.
1004. Pernyataan HRVD 6697.
1005. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal.184
1006. Pernyataan HRVD 1866.
1007. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 145
1008. CAVR, Profil Komunitas Desa Ope dan Desa Deudet, Subdistrik Lolotoe, Distrik Bobonaro, 14 Juli 2003.
1009. Pernyataan-pernyataan HRVD 5641; 7127; 5580; 5639 pertama dibawa ke sebuah pos KMP di Lolotoe di mana ia dipukul hingga babak belur, kemudian ke kantor polisi, kemudian ke Koramil, di sana ia diinterogasi oleh seorang komandan BTT; Pernyataan HRVD 7164 ditahan di Koramil tersebut sampai UNAMET tiba.
1010. UNTAET, Kejaksaaan Agung, Dakwaan terhadap João Franca da Silva et al. (Kasus No.: 4a-2001), 25 Mei 2001.
1011. Pernyataan-pernyataan HRVD 6428; 6393; F9425; 6429.
1012. Lihat juga Pernyataan HRVD 6371.
1013. Pernyataan HRVD 6405. Lihat juga Pernyataan-pernyataan 6403; 6441.
1014. Pernyataan-pernyataan HRVD 1754; 1747; 1719; 1755.
1015. Pernyataan HRVD 7419.
1016. Pernyataan HRVD 5824; 4850; 5790; 5753 dan 5752.
1017. Pernyataan-pernyataan HRVD 5824; 4850; 5790; 5753; 5752
1018. Pernyataan HRVD 2576.
1019. Pernyataan HRVD 6647
1020. Pernyataan HRVD 1833.
1021. Pernyataan HRVD 5602.
1022. CAVR, Profil Komunitas, Desa Lacro, Subdistrik Atsabe, Distrik Ermera, 16 Juni 2003.
1023. Pernyataan-pernyataan HRVD 1325; 3688; 3670; 1260; 6912; 3508; 2957.
1024. Pernyataan-pernyataan HRVD 0643; 5298; 7904.
1025. Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 176.
1026. Pernyataan HRVD 5298.
1027. Pernyataan-pernyataan HRVD 3670; 3858.
1028. CAVR, Profil Komunitas Aldeia Gildapil, Desa Lebos, Subdistrik Lolotoe, Distrik Bobonaro, 9 September 2003.
1029. CAVR, Profil Komunitas Desa Sabarai, Subdistrik Maliana, Distrik Bobonaro, 13 Januari 2003.
1030. CAVR, Profil Komunitas Desa Saboria, Subdistrik Aileu Villa, Distrik Aileu, 14 Maret 2003.
1031. Pernyataan-pernyataan HRVD 0225; 2868; 1954; 4652
1032. Pernyataan HRVD 0225.
1033. Pernyataan HRVD 8204.
1034. Pernyataan HRVD 1294.
1035. Lihat: "Surat Pengembalian," 8 Juli, 1999 (Koleksi Human Rights Unit, Dok. BOB#9) Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal. 209.
1036. Pernyataan HRVD 0227.

1037. Pernyataan HRVD 3754.
1038. CAVR, Profil Komunitas Desa Ahic, Subdistrik Lacluta, Distrik Viqueque, 22 November 2002.
1039. Pernyataan HRVD 7023.
1040. Pernyataan HRVD 7203.
1041. Pernyataan HRVD 6333.
1042. Pernyataan HRVD 6994; 7007; 7009; 7010.
1043. Pernyataan-pernyataan HRVD 2953; 2957; 7007; 7009.
1044. Pernyataan HRVD 2957.
1045. Pernyataan HRVD 7007.
1046. CAVR, Profil Komunitas Desa Fohoren, Subdistrik Fohorem, Distrik Covalima, 22 Januari 2004, Pernyataan-pernyataan HRVD 6272; 8933.
1047. Ibid.
1048. Pernyataan HRVD 8933.
1049. Pernyataan-pernyataan HRVD 3726; 4884; 4886; 5687; 0170; 3711; 0122.
1050. Pernyataan HRVD 4837.
1051. Pernyataan HRVD 8626.
1052. CAVR, Profil Komunitas Desa Ahic, Subdistrik Lacluta, Distrik Viqueque, 22 November 2002.
1053. Pernyataan-pernyataan HRVD 8738; 8743; 8734.
1054. Pernyataan HRVD 0143.
1055. Pernyataan HRVD 2412.
1056. Pernyataan HRVD 7398, lihat juga Pernyataan HRVD 8958.
1057. Pernyataan HRVD 2008; Lihat juga 2676.
1058. Pernyataan-pernyataan HRVD 8278, 6178, 4450, 4657, 4630, 0235, 3446, 5787, 3298, 4322, 7151, 4321, 1803, 8629, 5149, 1243, 7387, 5138, 7006, 6158, 7009, 3510, 7007.
1059. Pernyataan HRVD 3510.
1060. Pernyataan-pernyataan HRVD 1777; 0230; 6225; 2895; 5601; 0988; 4082; 7156; 6749; 2427; 1139; 5127; 2193.
1061. Pernyataan HRVD 1777.
1062. Pernyataan-pernyataan HRVD 4082; 6749; 1139; 5127.
1063. Pernyataan HRVD 0988.
1064. Pernyataan HRVD 5168.
1065. Pernyataan HRVD 4667.
1066. Pernyataan-pernyataan HRVD 2950-1, 0411, 4192-2, 5790, 5835, 1119, 7024, 6752-3, 0414-6&7, 5756, 4986, 3229, 7405-2, 4341-6, 5132, 3508, 4651, 0378-1, 0410, 1817.
1067. Pernyataan-pernyataan HRVD 2950-1; 0411; 4192-2; 5835; 1119; 6752-3; 0414-6 & 7; 5756; 4986; 3229; 7405-2; 4341-6; 5132; 3508; 4651; 0378-1; 0410; 1817.
1068. Pernyataan HRVD 8313.
1069. Pernyataan-pernyataan HRVD 6279, 0091
1070. Pernyataan HRVD 8294.
1071. Pernyataan HRVD 6751.
1072. Pernyataan HRVD 0145.
1073. Pernyataan HRVD 6272. Lihat juga Pernyataan HRVD 8933.
1074. Robinson, *East Timor 1999*, Submisi OHCHR kepada CAVR, April 2004, hal 54.
1075. Pernyataan-pernyataan HRVD 3670; 3858
1076. Pernyataan HRVD 6348.
1077. Pernyataan HRVD 7418.
1078. Pernyataan HRVD 3743.
1079. Pernyataan HRVD 3769.
1080. Pernyataan HRVD 7399.



Chega!

Bagian 7
Bab 7.5.

Pelanggaran hukum perang

Bab 7.5. Pelanggaran hukum perang

.....
1903 | Pendahuluan

.....
1908 | Standar yang relevan

.....
1909 | Pelanggaran hukum perang oleh pasukan militer Indonesia

1909 | Serangan terhadap warga sipil dan harta benda sipil

1916 | **Boks:** Bom datang dari udara, atau laut dan darat

1919 | Pelanggaran ekonomi dan harta benda—kerusakan sampingan atau strategi terencana?

1920 | 1975-1977

1923 | 1978-1979

1924 | Dekade 1980-an

1926 | Dekade 1990-an

1928 | Penghancuran pada 1999

1932 | Penganiayaan terhadap petempur musuh

1933 | **Boks:** Status Falintil

1936 | Sarana perang di luar hukum

1941 | Perekrutan paksa ke dalam kegiatan militer

1943 | Pola-pola perekrutan

1945 | Kerja sebagai TBO-resiko dan bahayanya

1948 | TBO dalam Operasi Kikis, 1981

1949 | Dipaksa mencari keluarga di hutan

1952 | Pasukan Tombak

1953 | Jaga malam dan patroli paksa

.....
1956 | Pelanggaran hukum perang oleh Fretilin/Falintil

1962 | Serangan terhadap objek-objek sipil

.....
1963 | Temuan

1963 | Temuan-temuan berkaitan dengan angkatan bersenjata Indonesia

1966 | Temuan mengenai pelanggaran oleh Fretilin/Falintil

Daftar tabel:

1940 | **Tabel 1** : Kemampuan taktis pesawat

1940 | **Tabel 2** : Jenis amunisi dan jangkauannya

Daftar grafik:

1943 | **Grafik 1** : Jumlah tindak perekrutan paksa yang dilaporkan, 1974- 1999

Pelanggaran hukum perang

7.5.

Pendahuluan

1. Mandat Komisi mewajibkan Komisi membuat laporan mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia, termasuk pelanggaran hukum humaniter internasional. Hukum ini sering disebut hukum perang atau hukum konflik bersenjata.¹
2. Banyak pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi selama periode mandat 1974-1999 juga merupakan pelanggaran standar-standar hak asasi manusia internasional dan karenanya telah dibahas dalam bab-bab lain dalam Laporan ini. Tujuan utama bab ini adalah untuk melaporkan pelanggaran hukum perang yang tidak dicakup oleh bab-bab lainnya. Ini termasuk kelalaian petempur untuk melindungi penduduk sipil, tawanan perang, dan orang-orang yang terluka serta kelompok orang-orang yang dilindungi lainnya; tidak membedakan antara sasaran sipil dan militer selama operasi militer; perekrutan paksa; penghancuran secara sengaja atas harta penduduk sipil; penggunaan senjata ilegal seperti senjata kimia; dan pelanggaran aturan-aturan lainnya terkait pelaksanaan operasi militer.
3. Bagian ini sangat mengandalkan sumber informasi tangan pertama yang dikumpulkan Komisi selama proses pengambilan pernyataan dan lokakarya Profil Komunitas di desa-desa, dan melalui wawancara-wawancara mendalam. Karena pelanggaran hukum perang, seperti pembunuhan dan penyiksaan penduduk sipil, juga merupakan pelanggaran standar hak asasi manusia internasional lainnya, terdapat sedikit pengulangan antara bab ini dengan bagian-bagian lainnya dalam Laporan ini.
4. Bukti yang dipertimbangkan Komisi di dalam bab ini dan bab-bab lainnya memberikan gambaran tentang pelanggaran hukum perang berskala luas dan sistematis oleh pasukan keamanan Indonesia selama invasi Timor-Leste dan masa-masa pendudukan sesudahnya, termasuk program intimidasi, kekerasan, dan penghancuran terkait dengan Jajak Pendapat pada 1999.

5. Tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran tidak bisa disamakan antara militer Indonesia (ABRI/TNI) dan Fretilin/Falintil, meskipun tindakan kedua pasukan bersenjata sama-sama memunculkan pelanggaran yang sangat beragam dan menyebabkan penderitaan luarbiasa di antara penduduk sipil Timor-Leste. ABRI/TNI dan kelompok binaannya jelas menjadi pelaku utama dalam hal ini. Fretilin/Falintil menyebabkan penderitaan dan kematian di antara penduduk sipil. Meski dalam banyak hal sangat berat, pelanggaran oleh Fretilin/Falintil hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan jumlah pelanggaran.

6. Kewajiban humaniter umum yang berlaku dalam situasi konflik bersenjata internal dilanggar baik oleh anggota Fretilin/Falintil maupun UDT selama periode konflik politik pada 1975. Pelanggaran-pelanggaran ini, seperti pembunuhan, penahanan, dan penyiksaan penduduk sipil dan tahanan telah dibahas secara komprehensif di bab-bab bersangkutan mengenai topik ini, dan di Bagian 8: Tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Karena itu, peristiwa perang saudara tidak dibahas secara mendalam di bab ini, meski ada ulasan singkat (lihat terutama Bagian 3: Sejarah konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.3: Pemandahan paksa dan kelaparan; Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan; Bab 7.8: Hak anak).

7. Pada 11 Agustus 1975, UDT melancarkan aksi bersenjata yang oleh banyak kalangan disebut Gerakan 11 Agustus. Latar belakang dan penjelasan terperinci mengenai aksi bersenjata ini dibahas secara mendalam di Bagian 3: Sejarah konflik. Mario Lemos Pires, Gubernur Portugis di Timor saat itu, menjelaskan kepada Komisi bahwa UDT mengambilalih kekuasaan dengan menggunakan senjata yang direbut dari polisi Portugis.² Para pemimpin Fretilin mundur ke markas besar mereka di Bukit Aileu, di selatan Dili. UDT menangkap anggota-anggota Fretilin di distrik di seluruh negeri dan menahan mereka (lihat Bab 7.4.: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan). Upaya pemerintah Portugis untuk merundingkan penyelesaian gagal, dan pada 20 Agustus Fretilin melancarkan aksi bersenjata balasan, yang oleh banyak kalangan masyarakat disebut “kudeta balasan”. Kekerasan pecah di semua distrik selama beberapa minggu, dan pada akhir September Fretilin praktis menguasai seluruh wilayah negeri ini. Para anggota UDT, Apodeti, dan partai-partai kecil Tralabalista dan KOTA, serta keluarga mereka melarikan diri ke barat menuju perbatasan. Fretilin menahan ratusan anggota UDT dan pada Oktober juga menahan anggota Apodeti. Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan membahas peristiwa ini secara mendalam.

8. Penduduk Timor-Leste yang melarikan diri ke wilayah perbatasan berada di bawah pengaruh militer Indonesia dan agen intelnya, dan banyak yang bergabung dengan pasukan partisan yang dilatih oleh militer Indonesia sejak akhir 1974. Serangan lintas batas mulai pada akhir Agustus, yang dilakukan oleh gabungan antara pasukan partisan ini dan pasukan reguler Indonesia.

9. Pada 15 Oktober, militer Indonesia melancarkan serangan skala penuh dengan dukungan dari laut dan udara, dan menduduki kota-kota seperti Batugade dan Balibó (Bobonaro) di Timor-Leste. Serangan di Balibó mencakup pembunuhan lima wartawan internasional (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

10. Setelah pasukan Indonesia menduduki kota-kota sampai jauh ke timur seperti Atabae (Bobonaro) dan Pemerintah Portugis tetap di Pulau Ataúro tanpa memedulikan permintaan Fretilin untuk kembali, serta pembicaraan internasional antara Portugal dan Indonesia tidak mempertimbangkan realitas pasukan Indonesia yang menduduki kota-kota Timor-Leste, Fretilin semakin membutuhkan intervensi dan dukungan internasional untuk melindungi wilayahnya dari agresi asing. Fretilin mengumumkan kemerdekaan secara sepihak pada 28 November 1975.

11. Dengan dukungan parlemen, militer Indonesia melancarkan invasi skala penuh ke Timor-Leste pada 7 Desember 1975. Para pemimpin Fretilin mundur ke pedalaman. Banyak penduduk sipil melarikan diri dari militer Indonesia yang datang menyerbu, atau dipaksa Fretilin melarikan diri ke pedalaman dengan mereka (lihat Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan). Penduduk sipil ini menderita luarbiasa di pedalaman selama perang yang berlangsung setelah itu.

12. Selama invasi, pasukan bersenjata Indonesia melakukan pelanggaran hukum perang dengan membunuh penduduk sipil di Dili pada 7 dan 8 Desember 1975 (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

13. Selama operasi militer skala besar setelah itu, di seluruh wilayah Timor-Leste militer Indonesia tidak membedakan antara penduduk sipil dan para petempur, dan mengerahkan kekuatan militer mereka yang besar untuk membunuh penduduk sipil tidak bersenjata dalam jumlah besar, termasuk laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Penduduk sipil secara khusus menjadi sasaran dalam operasi untuk memaksa mereka menyerahkan diri dari wilayah-wilayah yang dikuasai Fretilin/Falintil (lihat Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan). Jarang sekali penduduk sipil diberi peringatan lebih dahulu sebelum operasi militer dilancarkan.

14. Anggota ABRI/TNI secara rutin membunuh, menyiksa, dan memerkosakan penduduk sipil dan tahanan yang ditangkap atau menyerah selama tahun-tahun awal penyerbuan dan resistansi. Militer Indonesia menggunakan semua cara yang ada untuk mematahkan resistansi terhadap invasi dan pendudukan. Pada 1976, 1977, dan 1978 pelanggaran-pelanggaran ini bersifat luas dan sistematis. Ini termasuk penghancuran sistematis dan penjarahan harta penduduk sipil, termasuk bangunan, rumah, dan barang pribadi; penghancuran sumber makanan; dan pengerahan senjata yang dilarang oleh hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata. Alat yang digunakan termasuk senjata kimia yang meracuni sumber air, mematikan tanaman dan tumbuhan lainnya, dan menggunakan bom napalm dan alat-alat pembakar lain, yang efeknya membakar semuanya tanpa pandang bulu termasuk setiap orang dalam radiusnya, termasuk penduduk sipil laki-laki, perempuan, dan anak-anak.

15. Resistansi yang dipimpin oleh Fretilin/Falintil pada tahun-tahun awal setelah invasi merumuskan ideologi yang bertujuan membangun suatu revolusi sosial berdasarkan transformasi penduduk sipil yang tinggal di wilayah pedalaman yang dikuasai oleh para pemimpin politik dan bersenjata (lihat Bagian 5: Resistansi: Struktur dan strategi). Sejalan dengan meningkatnya skala serangan militer Indonesia yang semakin mendesak wilayah kekuasaan Fretilin/Falintil, perpecahan di antara pemimpin Fretilin mulai terjadi. Ini mendorong adanya pembersihan dengan kekerasan dalam tubuh partai pada 1977. Fretilin/Falintil bertanggung jawab atas pelanggaran seperti penahanan dan penyiksaan penduduk sipil dan tahanan lainnya seperti anggota Falintil, dan atas pembunuhan tahanan (lihat Bagian 3: Sejarah konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan). Semua ini dilakukan secara terorganisasi dan sistematis.

16. Setelah serangan militer Indonesia menghancurkan basis-basis Fretilin/Falintil di gunung (*bases de apoio* atau basis pendukung) pada akhir 1978, yang mengakibatkan penderitaan luarbiasa bagi ribuan penduduk sipil yang tinggal di wilayah-wilayah ini, para pemimpin politik dan militer Resistansi yang selamat melakukan perubahan strategi secara besar-besaran. Perubahan mendasar ini mengubah hubungan antara resistansi bersenjata dan penduduk sipil, yang sebagian besar pada awalnya ditahan di kamp penampungan dan pusat-pusat penahanan sementara dan kemudian bisa tinggal di kota dan desa-desa. Pada dekade 1980-an, sebuah struktur dan jaringan klandestin besar dibentuk untuk mendukung resistansi gerilya bersenjata (lihat Bagian 5: Resistansi: Struktur dan strategi). Selama periode ini, Fretilin/Falintil melanggar hukum perang dengan menyerang penduduk sipil, membakar rumah-rumah, dan mencuri bahan makanan dari penduduk sipil yang dicurigai bekerjasama dengan pasukan bersenjata Indonesia.³

17. Anggota ABRI/TNI secara sistematis melakukan perekrutan paksa penduduk sipil untuk dilibatkan dalam operasi militer mereka melawan resistansi bersenjata. Operasi paling besar melibatkan perekrutan paksa lebih daripada 60.000 penduduk sipil selama bulan-bulan Operasi Kikis pada 1981 (lihat bagian tentang perekrutan paksa ABRI/TNI untuk kegiatan militer, pada paragraf 114 – 174 di bawah). Lebih lanjut, sudah menjadi praktik militer yang rutin untuk memaksa penduduk sipil melayani dengan membawakan senjata dan amunisi dan memasak, membersihkan dan melayani kebutuhan pribadi penguasa militer. Orang-orang yang direkrut paksa, kebanyakan anak-anak, diperlakukan dengan buruk dan sering menjadi sasaran perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan.

18. Selama tahun-tahun pendudukan dan resistansi, ABRI/TNI secara teratur memberikan hukuman kolektif kepada penduduk sipil, termasuk membunuh, memerkosa, dan menyiksa anggota keluarga dan penduduk sipil yang menjadi anggota kelompok masyarakat yang sama dengan orang yang dicurigai mendukung Fretilin/Falintil. Praktik yang meluas terhadap penduduk sipil ini lebih kejam lagi setelah Falintil melakukan operasi militer terhadap sasaran-sasaran ABRI (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan).

19. Pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil termasuk eksekusi tahanan dan pembunuhan penduduk sipil, terutama yang dicurigai bekerjasama dengan militer Indonesia. Anggota Fretilin/Falintil meniksa dan membunuh anggotanya sendiri yang tidak setuju dengan kebijakan Komite Sentral Fretilin. Mereka juga membakar rumah orang yang dicurigai sebagai kolaborator, dan merampas harta benda mereka (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.3: Pemandahan paksa dan kelaparan; Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan).

20. Para perempuan dan gadis Timor yang ditahan sebagai tahanan atau dipaksa bekerja untuk anggota ABRI/TNI, secara rutin diperkosa dan dipaksa menjadi budak seksual, juga “diberikan” dari satu perwira ke perwira lain pada masa akhir tugas di wilayah ini (lihat Bab 7.7: Pemerksaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual).

21. Sejalan dengan semakin terlibatnya pemuda kota dengan Resistansi pada akhir dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an dan demonstrasi terbuka menjadi bentuk baru aksi Resistansi, ABRI/TNI melakukan pelanggaran terhadap penduduk sipil. Pembantaian Santa Cruz merupakan contoh paling terkenal mengenai militer Indonesia yang menembakkan senjata ke penduduk sipil tak bersenjata yang terlibat dalam demonstrasi damai, mengakibatkan banyak orang meninggal dan luka parah (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

22. Selama dekade 1990-an ABRI/TNI bertanggung jawab atas berlanjutnya praktik penahanan dan penyiksaan penduduk sipil, biasanya mereka yang dicurigai terlibat jaringan klandestin Resistansi. Praktik ini terutama ditujukan terhadap pemuda yang semakin terlibat dalam Resistansi selama periode ini. Praktik ini termasuk pembunuhan dan penghilangan mereka yang ditahan (lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan; Bagian 10: *Acolhimento* dan dukungan kepada korban).

23. Pada akhir 1998 dan awal 1999, ABRI/TNI membentuk milisi bersenjata di seluruh wilayah Timor. ABRI/TNI menjalankan program perekrutan paksa secara sistematis di antara ribuan pemuda Timor untuk bergabung dengan kelompok-kelompok ini, di samping mereka yang bergabung secara sukarela (lihat Bagian 3: Sejarah konflik; Bagian 9: Rekonsiliasi komunitas). Pasukan keamanan Indonesia dan milisi binaannya bertanggung jawab atas berbagai macam pelanggaran hukum perang, termasuk pembunuhan, perkosaan, penyiksaan, dan penghancuran besar-besaran secara sengaja harta milik penduduk sipil di seluruh wilayah Timor-Leste setelah Jajak Pendapat (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.3: Pemandahan paksa dan kelaparan; Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan; Bab 7.7: Kekerasan seksual).

Standar yang relevan

24. Standar yang digunakan oleh Komisi berkaitan dengan hukum internasional mengenai konflik bersenjata dibahas secara terperinci di Lampiran Bab 2: Mandat Komisi. Sebagian besar prinsip hukum yang relevan dengan konflik di Timor-Leste diambil dari Konvensi-konvensi Jenewa, di mana Indonesia dan Portugal adalah negara pesertanya, dan dari hukum kebiasaan internasional. Aturan-aturan yang paling fundamental tecermin dalam empat prinsip dasar berikut ini:⁴

1. Kekuatan tersebut hanya digunakan sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah (prinsip keperluan militer).
2. Semua tindakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.⁵
3. Serangan hanya boleh dilancarkan terhadap sasaran militer, dan dengan cara yang meminimalkan kerugian pada penduduk sipil dan objek-objek sipil. Serangan samasekali tidak boleh dengan sengaja diarahkan kepada penduduk sipil dan objek sipil (prinsip pembedaan).
4. Bilamana suatu serangan mungkin mengakibatkan korban sipil yang tidak disengaja, serangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kerugian terhadap warga sipil dan objek sipil tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat (prinsip proporsionalitas).

25. Standar-standar ini berlaku bagi pasukan militer Indonesia. Standar-standar ini juga berlaku bagi Falintil, yang bisa diakui dalam hukum humaniter internasional sebagai gerakan resistansi karena memenuhi secara umum syarat untuk pengakuan tersebut: Falintil mempunyai struktur komando; anggotanya membedakan diri dengan penduduk sipil; mereka membawa senjata secara terbuka; dan melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.⁶

26. Bahkan dalam hal bila Komisi mempunyai akses penuh ke semua bukti faktual, hal ini tidak selalu memungkinkan untuk membedakan antara keadaan di mana penduduk sipil secara langsung dan sengaja dijadikan sasaran, dan keadaan di mana penduduk sipil terbunuh atau terluka dalam pertempuran yang tidak secara langsung menjadikan mereka sasaran. Dalam banyak operasi militer yang diperiksa oleh Komisi dalam Laporan ini, Komisi menemukan bahwa serangan tidak memedulikan dampaknya terhadap penduduk sipil, atau tidak sesuai dengan keperluan militer, dan karena itu merupakan pelanggaran hukum perang. Khususnya, bukti-bukti yang dipaparkan dalam bab ini dan yang dibahas lebih mendalam di dalam bab-bab bersangkutan di Laporan ini, menunjukkan bahwa ABRI/TNI secara sistematis

⁴ Prinsip kemanusiaan yang paling terkenal tecermin dalam Klausula Martens yang ada dalam mukadimah Konvensi Den Haag (IV) Mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Daratan tahun 1907.

⁵ Artikel 1, Peraturan Den Haag 1907; Aturan hukum humaniter mengikat kelompok non-negara yang terlibat konflik: Liesbeth Zegveld, *The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, hal. 9-38. Lihat juga Bagian 2: Mandat Komisi, Lampiran A.

mengabaikan dan secara sengaja melanggar kewajibannya untuk melindungi penduduk sipil Timor-Leste sesuai dengan Konvensi Jenewa yang ditandatangani oleh Republik Indonesia.

Pelanggaran Hukum Perang oleh Pasukan Militer Indonesia

Serangan terhadap warga sipil dan harta-benda sipil

27. Hukum internasional tentang konflik bersenjata dengan jelas menyatakan bahwa serangan tidak boleh ditujukan kepada penduduk sipil, objek-objek sipil, atau kota atau bangunan yang tidak dipertahankan.⁵ Selain itu tindakan-tindakan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di antara penduduk sipil juga dilarang.⁶

28. Serangan tidak boleh dilancarkan dengan cara atau dengan menggunakan senjata yang tidak memungkinkan untuk membedakan sasaran sipil dan sasaran militer.⁷

29. Korban sipil insidental dan kerusakan objek sipil yang disebabkan oleh serangan terhadap sasaran militer diperbolehkan hanya selama serangan tidak berlebihan dalam kaitannya dengan keperluan militer dalam serangan tersebut.⁸ Serangan harus dijalankan dengan cara yang meminimalkan korban sipil dan kerusakan objek sipil.⁹ Bilamana mungkin, peringatan dini harus diberikan kepada penduduk sipil mengenai serangan yang mungkin melukai penduduk sipil.¹⁰

30. Subbab ini akan membahas pelanggaran hukum perang oleh ABRI/TNI pada tahun-tahun awal konflik.

31. Mulai Agustus 1975, ABRI/TNI melakukan serangan-serangan lintas batas di Timor-Leste, termasuk pembunuhan penduduk sipil dan penghancuran harta benda penduduk sipil (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Pada 15-16 Oktober, pasukan bersenjata Indonesia meningkatkan operasi, termasuk pengeboman dari udara dan laut dalam skala besar di dalam wilayah Timor-Leste. Serangan-serangan ini memakan korban sipil dan menghancurkan harta benda penduduk sipil.

32. Serangan skala penuh dimulai pada 7 Desember 1975, dengan gabungan serangan darat, udara, dan laut pertama-tama di Dili dan kemudian di Baucau. Serangan-serangan ini diperluas ke Distrik Bobonaro, Ermera, Manufahi, dan Covalima. Serangan-serangan ini mengakibatkan banyak korban meninggal di antara penduduk sipil, pengungsian massal, dan penghancuran skala besar bangunan umum dan pribadi. Selama serangan-serangan awal ini, penduduk sipil yang tidak bersenjata dijadikan sasaran langsung oleh pasukan ABRI dengan dibunuh, dan pada umumnya ABRI tidak membedakan antara sasaran sipil dan militer.

33. Penggunaan senjata mesin berat, bazoka, granat, mortir, dan artileri baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengakibatkan kerusakan besar yang tidak terelakkan. Sering tidak jelas apakah serangan ini terarah atau membabit. Komisi menerima bukti-bukti kuat dari pernyataan yang dikumpulkan di seluruh Timor-Leste yang kuat mengindikasikan bahwa militer Indonesia yang melakukan invasi memiliki kebijakan yang melibatkan penghancuran sistematis dan perampasan rumah, ternak, dan tanaman pangan, serta pembunuhan penduduk sipil secara sengaja.¹¹ José da Silva Amaral menjelaskan kepada Komisi tentang penghancuran sumber makanan secara sengaja oleh ABRI/TNI dalam serangan-serangan mereka di Osso-Gori, Uaibobo (Ossu, Viqueque) pada 1976:

Ketika ABRI menyerang kota Ossu pada saat musim kemarau tahun 1976, istri saya, Ceverina, anak saya, Arlindo, dan saya pada saat itu tinggal di Basilau, Osso-Gori, Suco Uaibobo. Kami mengungsi ke Gunung Builo, Ossorua. ABRI bergerak maju memasuki kota Ossu. Mereka membangun pos di dekat kebun milik saya di Loilubu, Ossurua. Dalam suatu patroli mereka membakar rumah saya di Basilau. ABRI meninggalkan pos tersebut setelah kurang lebih satu bulan menetap di sana. Setelah saya tahu bahwa ABRI telah pergi, saya dan seorang saudara ipar saya bernama Patricio datang untuk mengecek kebun kelapa milik saya tersebut. Ternyata kebun saya porak-poranda, pohon pisang ABRI babat habis untuk membangun benteng pertahanan ABRI. Sedangkan kelapa saya yang berjumlah kurang lebih 300 pohon juga mereka potong semua. Hanya tinggal satu pohon saja yang dibiarkan hidup.¹²

34. Selain menjadi sasaran dan menderita dari serangan membabit, penduduk sipil juga dihukum berat oleh ABRI/TNI apabila mereka dicurigai membantu pasukan Fretilin/Falintil. Hukuman ini beragam bergantung pada situasi dan individu yang terlibat. Lobato Amaral, prajurit muda Falintil, menyatakan kepada Komisi bahwa kakak laki-lakinya, Leonardo Freitas, dan 11 penduduk sipil ditangkap dan dibunuh oleh ABRI/TNI di Bobonaro karena dicurigai menyediakan makanan baginya dan prajurit Falintil lainnya pada 1979.¹³

35. Kecurigaan apapun mengenai adanya hubungan dengan orang-orang yang lari ke hutan, apakah mereka bagian dari pasukan Fretilin/Falintil atau tidak, dapat menimbulkan pembalasan dari ABRI/TNI. Sebagai contoh, pada 1977 Frederico Gonçalves dari Atabae (Bobonaro) melaporkan bahwa ternaknya dirampas anggota milisi Halilantar yang mencurigainya mempertahankan hubungan dengan saudara laki-lakinya di hutan.¹⁴

36. Selama periode awal invasi, berlangsung pertempuran sengit di banyak tempat saat pasukan Fretilin/Falintil menahan gerakan maju pasukan Indonesia. Komisi menerima sejumlah laporan tentang serangan balas dendam brutal pasukan Indonesia terhadap penduduk sipil setiap kali mereka menguasai suatu wilayah. Di Desa Leimea Kraik (Atsabe, Ermera), contohnya, ABRI secara sengaja membakar

rumah-rumah bersama para penghuni yang berada di dalamnya.¹⁵ Resistansi tanpa kekerasan dari penduduk sipil kerap ditanggapi dengan kekuatan mematikan yang menimbulkan rasa takut dan panik yang luas ketika puluhan ribu orang melarikan diri ke gunung dan hutan untuk mencari perlindungan dan tempat aman. Komisi menerima banyak laporan mengenai hal ini dari berbagai wilayah di negeri ini, yang menunjukkan kerentanan penduduk sipil Timor-Leste menghadapi pasukan Indonesia yang bergerak maju hingga akhir 1978.¹⁶

37. Meski banyak orang mencari perlindungan dan tempat yang aman di wilayah-wilayah yang dikuasai pasukan Fretilin/Falintil, ketenangan ini terbukti hanya sementara, saat pasukan Indonesia berusaha memperkuat pendudukan. Agustino Soares mengatakan kepada Komisi:

Pada waktu evakuasi ke hutan dan sembunyi di Katrai Leten, di bawah kaki Gunung Ramelau, saya berusia 17 tahun. Saya sembunyi di sana bersama sepuluh orang anggota keluarga. Penduduk yang terkonsentrasi di Katrai Leten pada waktu itu sekitar ribuan orang, termasuk penduduk yang datang dari Letefoho, Ermera, Ainaro, Aileu, dan Cailaco.

Katrai Leten merupakan basis pertahanan Fretilin terbesar kedua di Ermera setelah Fatubesse, sehingga situasi keamanannya pun cukup aman, karena di depan pasukan Fretilin menjaga musuh, sedangkan kami tinggal di belakang sambil membuat kebun maupun ladang. Jadi, bahan makanan bagi kami pada waktu tinggal di Katrai Leten adalah cukup tersedia, sehingga jarang orang meninggal dunia karena kelaparan maupun penyakit.

Namun dua tahun kemudian, yaitu tahun 1978, pasukan militer Indonesia mulai melakukan operasi ke basis pertahanan kami di Katrai Leten, sehingga menyebabkan kami pindah dari Katrai Leten menuju lokasi yang lain. Pada waktu itu kekuatan pasukan militer Indonesia [ABRI] datang dari arah Atsabe, Ainaro, Same, dan Bobonaro, mereka membentuk formasi pengepungan dengan sistem lingkaran penuh, sambil mengelilingi basis konsentrasi kami di Katrai Leten, barulah mereka [ABRI] menyerang bersama-sama.

Pada waktu itu ABRI menembak kami dengan mortir, bazoka, dan meriam. Di atas udara pesawat tempur membom kami. Bom yang dijatuhkan tidak membakar orang, tetapi ranjauinya membunuh banyak orang karena banyak orang yang tidak sempat bersembunyi di tempat-tempat yang strategis. Akibat dari penyerangan ABRI tersebut menyebabkan basis pertahanan kami Katrai Leten hancur pada tanggal 18 Mei 1978.¹⁷

38. Di seluruh Timor-Leste, seluruh komunitas terpaksa harus terus berpindah. Komisi menerima pernyataan mengenai pola pengalaman yang serupa, yang memuncak dengan kematian, penangkapan, atau penyerahan diri komunitas dan

individu dari seluruh pelosok negeri. Pengalaman penduduk Desa Muapitine (Lospalos, Lautém) menggambarkan hal ini. Ketika pasukan ABRI/TNI mendarat di Pantai Com pada Februari 1976 dan mulai menembaki warga sipil, penduduk setempat lari ke gunung. Selama dua tahun, mereka tinggal bersama, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Selama 1977-1978, 155 penduduk desa Muapitine mati kelaparan, sementara tujuh orang lagi meninggal selama serangan ABRI/TNI pada 1978. Sebagaimana di banyak tempat lainnya, pada akhir 1978, penduduk desa yang selamat mulai menyerahkan diri kepada ABRI/TNI.¹⁸

39. Komisi memperoleh kesaksian yang memaparkan kejadian saat para komandan ABRI/TNI sengaja tidak melindungi penduduk sipil dari penganiayaan, atau tidak membedakan penduduk sipil dari pasukan Fretilin/Falintil. Mantan prajurit ABRI/TNI dari Timor-Leste yang berbasis di Same selama 1977 menyatakan kepada Komisi bahwa sebelum melancarkan operasi di sekitar Gunung Kablaki, anggota Kodim dan Hansip di Manufahi diberi perintah oleh komandan Kodim untuk membunuh siapa saja yang mereka temukan selama operasi, tanpa membedakan apakah mereka penduduk sipil atau prajurit Fretilin/Falintil.

Ketika kami mengadakan operasi ke Kablaki pada tahun 1977, operasi tersebut dilakukan oleh tentara dan Hansip dari dua daerah yaitu Ainaro dan Same, sehingga operasi itu berbentuk lingkaran dengan tujuan agar dapat membendung pasukan Falintil dan masyarakat sipil yang masih bersembunyi di hutan. Pada saat operasi ke Kablaki penyerangan itu dilakukan serentak dan kami diperintahkan oleh Komandan Kodim bahwa pada saat operasi berlangsung siapa saja yang Anda lihat, baik itu masyarakat sipil maupun Falintil, tidak bisa diampuni, langsung tembak dan bila perlu ditangkap.

Waktu kami tiba di puncak Gunung Kablaki kami melihat sekelompok orang sekitar lima atau enam orang sehingga kami langsung tembak dan kami tidak tahu apakah itu Falintil atau masyarakat sipil. Merekapun langsung lari dan kami hanya menemukan barang-barang mereka seperti sarung persediaan makanan yang ditinggalkan. Lalu kami pun melanjutkan operasi kembali ke Same dengan melewati Rotuto.¹⁹

40. Mantan tentara ini juga menjelaskan kejadian lain selama operasi di sekitar Same yang bertujuan mencari Falintil dan penduduk sipil yang masih bersembunyi di hutan, di mana seorang perempuan tua yang ditemukan oleh tentara dalam sebuah gubuk di desa yang ditinggalkan penduduknya dibunuh oleh seorang anggota Hansip.²⁰

41. Gerakan maju dan serangan-serangan militer Indonesia terhadap komunitas-komunitas di wilayah yang belum mereka kuasai berlanjut sepanjang 1978. Dapat diduga, penduduk sipil terus menjadi pihak yang paling menderita akibat serangan tersebut. Maria José da Costa menceritakan pengalaman komunitasnya di wilayah sekitar Dolok di Distrik Manufahi kepada Komisi:

Pada tahun 1978 musuh mulai mengepung kami di Suco Dolok dan banyak yang meninggal akibat kelaparan. Semua makanan...dibakar. Mereka mengepung kami dari laut dengan kapal perang, dari udara dengan pesawat udara, dan dari darat dengan membakar rumput-rumput dan mengepung dengan tentara. Pada saat itu bulan Agustus, saat musim kemarau. tentara membakar alang-alang sehingga api dengan cepat membakar wilayah tersebut bagaikan disiram dengan bensin. Banyak orang yang meninggal karena tidak dapat menyelamatkan diri dari kepungan api.²¹

42. Militer Indonesia telah salah memperkirakan bahwa kekuatan persenjataannya yang sangat besar dapat menuntaskan pendudukannya atas Timor-Leste dengan relatif cepat. Ketika hal ini tidak terjadi dan laju pasukan Indonesia terhenti, dengan pasukan Fretilin/Falintil tinggal di antara penduduk sipil di bagian-bagian wilayah pedalaman, pasukan Indonesia melancarkan serangan besar-besaran terhadap basis resistansi. Pada 1978 serangan-serangan ini dikenal sebagai 'kampanye pengepungan dan penghancuran', dan menimbulkan banyak korban di antara penduduk sipil di basis-basis ini. Kenyataan bahwa begitu banyak warga sipil yang tinggal bersama pasukan Fretilin/Falintil di basis-basis ini mungkin menjadi penyebab sulitnya membedakan antara penduduk sipil dan petempur. Namun, bukti yang diserahkan kepada Komisi memberikan gambaran yang jelas tentang kampanye militer ABRI/TNI yang mengabaikan prinsip perlindungan kepada penduduk sipil atau perlunya membedakan penduduk sipil dari para petempur. Serangan-serangan di wilayah ini tampaknya didasarkan pada asumsi bahwa siapapun, pemberontak atau penduduk sipil, yang tinggal di luar wilayah kekuasaan militer Indonesia adalah sasaran yang sah (lihat Bagian 3: Sejarah konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.3.: Pindahan paksa dan kelaparan).

43. Komisi mendengar kesaksian serupa dari banyak daerah di negeri ini, saat orang dan komunitas-komunitas berusaha mati-matian untuk berada di luar jangkauan militer Indonesia yang bergerak maju. Banyak penduduk menghabiskan antara tiga hingga empat tahun dalam pelarian, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, hidup dalam kondisi yang sangat sulit yang terus mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dan bahkan seluruh keluarga.²² Komunitas Desa Aiassa dan Malilait, di Subdistrik Bobonaro (Bobonaro) menceritakan kepada Komisi:

Pada bulan Januari 1976 militer Indonesia memasuki kecamatan Bobonaro. Tembakan dari darat dan udara terus menerus dilepaskan sehingga membuat seluruh masyarakat mengungsi ke Lour. Ketika itu makanan yang dibawa hanya sedikit. Setelah itu penduduk bertahan di Holba, Anapal, selama sekitar satu tahun sambil berkebun dan menggarap sawah. Sambil menunggu waktu panen, sehari-harinya penduduk mencari umbi-umbian untuk dimakan. Sayangnya ketika musim panen tiba, TNI dan Partisan kembali memaksa penduduk pindah dari Holba ke Fatuleto dan meninggalkan hasil kebun dan sawah tidak dipanen. Penduduk tinggal di Fatuleto sekitar satu

tahun, tetapi penduduk harus terus mengungsi ke Molop kemudian ke Dikehili, di mana pada saat itu banyak penduduk yang meninggal karena ditembak dari udara, sakit, serta kekurangan makanan.

Pada tahun 1978, penduduk kembali melarikan diri ke Halik akibat tembakan terus-menerus dari udara yang dimulai pada jam tujuh hingga jam sembilan pagi yang mengakibatkan kurang lebih tujuh orang meninggal dunia, tak terhitung orang yang meninggal karena kelaparan, karena menderita sakit, dan ada yang meninggal karena keracunan ketika makan daun-daunan.

Karena semakin terdesak, akhirnya penduduk berangsur-angsur menyerah ke pasukan Batalion 507 pada tahun 1979.²³

44. Komisi menerima 247 pernyataan dari Distrik Baucau yang melaporkan 278 kasus serangan terhadap penduduk sipil dan sasaran sipil sepanjang periode Operasi Seroja pada dekade 1970-an. Laporan-laporan serupa diterima dari Aileu, di mana tercatat adanya 97 warga sipil yang meninggal dan perusakan sasaran sipil selama operasi ABRI/TNI.

45. Penduduk sipil juga meninggal akibat kelaparan setelah ternak dan persediaan bahan makanan mereka dihancurkan atau dicuri, atau karena melarikan diri dengan membawa sedikit bekal makanan atau tidak membawa bekal makanan samasekali untuk bertahan hidup. Dalam periode yang sama, tekanan yang meningkat di *zona libertadas* atau zona bebas, akibat operasi ABRI/TNI, membuat hidup menjadi sangat sulit serta mengakibatkan hilangnya nyawa penduduk sipil yang tinggal di wilayah-wilayah ini. Pergerakan pada awalnya terbatas di wilayah-wilayah ini, dan kemudian penduduk sipil terpaksa selalu bergerak untuk menghindari serangan-serangan ABRI/TNI sehingga mereka tidak bisa menanam dan memanen tanaman pangan (lihat Bab 7.3: Pemandahan paksa dan kelaparan).

46. Bagi Fretilin/Falintil, kerawanan situasi mereka menjadi kekhawatiran utama. Membatasi gerakan penduduk sipil adalah konsekuensi langsung dari perlunya mengamankan dan mempertahankan kontrol geografis dan fisik. Pembatasan-pembatasan seperti ini tidak hanya ditujukan bagi kader politik dan militer Fretilin/Falintil. Cara-cara yang keras, bahkan brutal, sering dilakukan sendiri oleh penduduk sipil yang ingin bertahan hidup. Bertahan agar tidak terlacak saat berada di hutan sering menghadapkan mereka pada pilihan hidup atau mati. Adriano João menjabat sebagai asisten politik Fretilin (*adjunto*) di Zona Cailaco dan menggambarkan kepada Komisi langkah-langkah akhir yang diambil penduduk sipil untuk bertahan hidup selama periode ini:

[Di Purugua] saya melihat seorang ayah mencekik anaknya yang masih berumur sekitar empat tahun hingga mati karena anak tersebut menangis terus. Pada saat itu ada konsensus antara masyarakat bahwa siapa saja termasuk anak-anak yang menyebabkan ABRI mengetahui keberadaan penduduk sipil harus disingkirkan. Anak saya sendiri yang berumur satu setengah tahun nyaris dibuang karena menangis terus.²⁴

47. Sekali pihak Indonesia menemukan lokasi konsentrasi pejuang Fretilin/Falintil atau penduduk sipil di wilayah tertentu, praktik yang lazim ialah menyerang lokasi tersebut dengan senjata berat. Serangan-serangan ini sering membabitkan dan mematikan. Pada 1978, misalnya, pengeboman udara dan laut menyebabkan 100 orang meninggal di antara penduduk Desa Aidantuik (Suai, Covalima) yang mengungsi ke Beco (Suai, Covalima).²⁵

48. Basis Fretilin/Falintil di Gunung Matebian (Distrik Baucau dan Viqueque) di timur menjadi salah satu pusat resistansi terakhir pada 1978 saat serangan-serangan ABRI/TNI menghancurkan *base de apoio* atau basis dukungan Fretilin/Falintil. Setelah invasi, pada awal 1976, pasukan Fretilin/Falintil mengevakuasi banyak penduduk sipil dari Baucau, Viqueque, dan Lautém ke gunung ini. Banyak penduduk sipil Timor melarikan diri ke gunung untuk menghindari serangan militer Indonesia pada tahun-tahun awal invasi. Pada 1978, Gunung Matebian menjadi salah satu tempat berlindung utama yang terakhir. Setelah gerakan maju militer Indonesia menghancurkan basis-basis lain, pasukan Fretilin/Falintil dan penduduk sipil kembali menuju basis di Matebian. Sebagai reaksi, antara Agustus dan Oktober tahun itu pihak militer Indonesia melancarkan serangan-serangan yang membinasakan dari darat, udara, dan laut ke gunung tersebut. Armindo da Silva, yang pada saat itu melarikan diri ke gunung itu, menceritakan kepada Komisi:

*Ketika saya dan keluarga saya tinggal di Matahoi, Uatulari [Viqueque], saya mendengar bahwa TNI melakukan penyerangan ke Osso Lero di kaki Gunung Matebian, di wilayah Baguia. Banyak masyarakat sipil dari Ossu tewas akibat serangan bom membabitkan dari udara dan tembakan mortir dari arah Quelicai [Baucau] oleh TNI... Selain itu keponakan saya bernama Januario da Silva, berumur 20 tahun, dan ibu saya yang bernama Paeloi...dan liurai Uaibobo juga tewas akibat kena bom.*²⁶

49. Tempat pengungsian di gunung tersebut dikepung oleh ABRI/TNI dan serangan sistematis mulai dilancarkan untuk memaksa semua orang di gunung menyerah. Banyak komunitas yang dihubungi Komisi melaporkan kematian dan kehancuran yang terjadi akibat serangan ABRI/TNI.²⁷ Komisi menerima laporan mengenai ribuan penduduk yang terbunuh atau terluka sebelum izin untuk menyerah dikeluarkan oleh komandan Fretilin/Falintil pada 22 November 1978 (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.3: Pemandahan paksa dan kelaparan).

Bom datang dari udara, atau laut dan darat

Komunitas di Desa Defawassi, di Subdistrik Baguia di wilayah Pergunungan Matebian di Baucau menceritakan kepada Komisi tentang pengalaman mereka saat militer Indonesia melancarkan serangan terakhir di gunung tersebut pada akhir 1978:

1978 adalah tahun ketika satuan-satuan angkatan darat, laut, dan udara Indonesia (Paskhas) dan Brigade Mobil Polisi (Brimob) menyerang, dengan membentuk sebuah pagar di sekeliling Gunung Matebian, yaitu Formasi Cincin. Penduduk Desa Defawassi, Viqueque, Baucau, dan Lospalos berada di dalam lingkaran tersebut. Pagar ini diperketat setiap hari dan semakin banyak penduduk sipil terperangkap di Gunung Matebian.

ABRI/TNI menggunakan kesempatan ini untuk menyerang orang-orang, dengan serangan darat, dengan meriam, bazoka, mortir, dan roket; dan serangan meriam laut. Serangan yang tak henti-hentinya dilakukan menghancurkan mataair, tidak memberikan kesempatan untuk menyiapkan makanan, dan menciptakan situasi kacau.

Banyak orang mati terkena bom atau karena kelaparan, kehausan, atau tersesat di gunung. Para penduduk desa juga mati karena luka terkena peluru senjata otomatis. Diperkirakan 100 penduduk Desa Defawassi dari segala umur, laki-laki dan perempuan, mati di Gunung Matebian. Dari tanggal 2 Oktober hingga 28 November 1978, penduduk Desa Defawassi mulai kembali ke Kota Baguia dari Gunung Matebian.²⁸

50. Meningkatnya serangan ABRI/TNI sepanjang 1979 semakin memperburuk kondisi penduduk sipil di pedalaman, yang kemudian memaksa semakin banyak penduduk sipil menyerahkan diri kepada ABRI/TNI. Penduduk lainnya tetap lari dari serangan, hingga akhirnya menyerah.²⁹ Penyerahan massal terakhir penduduk sipil terjadi setelah jatuhnya basis Matebian pada November 1978, setelah Fretilin/Falintil memberi izin menyerah (lihat Bagian 3: Sejarah konflik; Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan).

51. Situasi setelah penangkapan atau penyerahan diri sangat suram. Militer Indonesia memisahkan mereka yang ditengarai sebagai Fretilin/Falintil, banyak di antaranya dieksekusi atau menghilang (lihat Bagian 3: Sejarah konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Penduduk sipil lainnya pertama-tama ditahan di kamp-kamp sementara, kemudian di pusat penahanan, dan akhirnya dimukimkan kembali di wilayah-wilayah di bawah kekuasaan ABRI/TNI. Makanan dan obat-obatan tidak mencukupi untuk penduduk sipil dalam jumlah sangat besar yang ditahan di tempat penahanan, dan ribuan meninggal karena kelaparan dan penyakit dalam tahun yang mungkin paling tragis dalam

sejarah Timor-Leste. Bab 7.3: Pemandangan paksa dan kelaparan, menjelaskan kejadian tragis ini dan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terkait. Komunitas di seluruh negeri menceritakan pengalaman mereka selama periode ini kepada Komisi. Misalnya, komunitas di Liquidoe (Aileu), Remexio (Aileu), dan Metinaro (Dili) merenungkan besarnya jumlah kematian penduduk sipil setelah menyerah kepada pasukan Indonesia karena kelaparan dan penyakit di kamp.³⁰

52. Meskipun serangan-serangan terhadap penduduk sipil dan sasaran sipil menurun tajam setelah Operasi Seroja berakhir pada 1979, penduduk sipil terus menjadi sasaran dan terkena dampaknya akibat taktik antipemberontakan yang dilancarkan ABRI/TNI, yang terus berlanjut selama pendudukan Timor-Leste.

53. Selama Operasi Kikis pada 1981, misalnya, Komisi menerima sejumlah laporan tentang eksekusi oleh ABRI/TNI terhadap penduduk sipil yang menyerah maupun penduduk sipil yang dipaksa terlibat dalam operasi. Komunitas dari Desa Orlalan, Batara (Laclubar, Manatuto) menggambarkan pengalaman mereka saat dipaksa bergabung dalam operasi tersebut:

Setelah menerima perintah dari Manatuto dan Dili agar menyiapkan penduduk untuk ikut Operasi Kikis, Komandan Koramil Laclubar langsung memerintahkan kepada kepala suco[desa] dari enam suco agar memilih penduduk laki-laki yang postur tubuhnya besar diharuskan ikut, kecuali anak-anak dan orang tua. Pada saat itu semua sekolah ditutup. Penduduk hanya diperbolehkan membawa pisau, tombak, panah, dan kentungan bambu. Tiap orang harus ada ikat kepala dari kain sebagai tanda. Makanan harus dibawa sendiri dan tiap suco ada pemimpinnya. Penduduk kemudian dipaksa berjalan mulai jam enam pagi untuk mencari Falintil dan sisa-sisa penduduk yang masih di hutan. Jika ketemu maka harus ditangkap atau dibunuh agar perang cepat selesai.

Di Fatuhada[Laclubar, Manatuto] terjadi kontak senjata antara Batalion 744 dan Falintil, dan pada saat itu 15 anggota Falintil tewas dan penduduk sipil yang menyerah sekitar 50 orang tersebut dibunuh semuanya oleh Batalion 744. Pada saat itu juga ada seorang ibu hamil yang ditikam perutnya sehingga bayi yang dikandungnya pun meninggal. Setelah dibunuh, mayat-mayat tersebut kemudian dipotong-potong dan dikuburkan.

Selama operasi berlangsung, pasukan dari Batalion 744 yang mencurigai penduduk Laclubar berhubungan dengan Fretilin memerintahkan penduduk Laclubar agar merusak tanaman yang bisa dimakan agar Fretilin tidak mendapat makanan dan cepat menyerah. Perintah ini disertai ancaman dibunuh jika penduduk tidak menuruti perintah tersebut. Selama 40 hari perjalanan dalam operasi ini, satu orang penduduk Laclubar yang sakit meninggal dunia karena tidak sempat diobati dan seorang ditembak ABRI di Aitana tetapi ABRI memberi alasan bahwa ABRI salah lirik. Setelah itu penduduk Laclubar kembali ke suco mereka masing-masing di Laclubar.³¹

54. Albino da Costa, seorang mantan pejuang Falintil, menceritakan kepada Komisi:

Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana militer Indonesia dari Batalion 744 membunuh penduduk. Mereka menangkap orang-orang tak bersenjata, mengikat mereka, lalu menusuk mereka hingga mati. Ada perempuan hamil yang ditangkap dan dibunuh seperti itu, saya lihat dari jarak dekat, kira-kira 100 meter dari tempat kejadian.³²

55. Ketika gerakan maju mencapai wilayah Lacluta (Viqueque) pada September 1981, terjadi pembantaian yang menurut beberapa kesaksian membunuh ratusan orang. Sementara Indonesia mengumumkan kemenangan militer di daerah tersebut pada saat itu, dengan menyatakan tertangkapnya 450 anggota Fretilin beserta 150 senjata, Mgr. Martinho da Costa Lopes, Administrador Apostolik Katolik Timor-Leste saat itu, mengklaim bahwa 500 orang terbunuh (lihat Bagian 3: Sejarah konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Pemerintah Indonesia mengakui 70 orang terbunuh.³³ Pihak-pihak lain memperkirakan jumlah yang meninggal mencapai ratusan orang.³⁴ Meski angka pasti mengenai insiden tersebut tidak ada, termasuk perincian apakah mereka yang terbunuh adalah petempur atau penduduk sipil, sebagian besar sumber menyebut hal ini sebagai pembantaian brutal penduduk sipil (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

56. Pemberontakan 1983 oleh anggota Hansip dan Ratih Timor-Leste melawan militer Indonesia di Kraras (Viqueque, Viqueque) merupakan salah satu kasus yang paling kejam mengenai balas dendam ABRI/TNI terhadap penduduk sipil (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Pemberontakan dikoordinasi secara ketat oleh Falintil. Setelah membunuh 12 anggota Zipur 4 Batalion Teknik, anggota Hansip dan Ratih menyeberang ke Falintil dengan senjata mereka. Penduduk sipil menjadi rentan. Banyak penduduk yang melarikan diri ke hutan dan gunung sekitar karena takut akan tindakan balas dendam. Militer Indonesia melakukan tindakan hukuman kolektif yang mengerikan terhadap penduduk sipil yang tidak terlibat dalam penyerangan melawan pasukan mereka.

57. Serangkaian pembantaian penduduk sipil di daerah ini kemudian dimulai. Pada 7 September, tentara ABRI/TNI memasuki Desa Kraras dan membunuh empat atau lima penduduk sipil, termasuk seorang perempuan tua. Mereka kemudian membakar rumah-rumah penduduk. Mayat dari beberapa korban pembunuhan ditinggal di rumah yang terbakar.³⁵ Selama beberapa minggu setelahnya tentara Indonesia melakukan patroli di seluruh wilayah pergunungan di sekitarnya untuk memaksa mereka yang melarikan diri agar kembali ke Desa Kraras dan Buicaren, dan ke Kota Viqueque. Komisi menerima laporan bahwa sejumlah individu dieksekusi selama operasi ini, termasuk anak laki-laki berusia 15 tahun atau sekitar 12 tahun, dan tiga orang lain pada 15 September.³⁶ Selama masa itu banyak orang juga ditahan dan disiksa, kebanyakan di Olobai, tempat terdapat basis satu kompi dari Batalion Infanteri 745.

58. Komisi diberi tahu oleh korban yang selamat bahwa pada pagi hari 16 September tentara Indonesia dan Hansip membawa sekelompok besar penduduk sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, ke Desa Caraubalo. Penduduk desa kemudian diangkut ke lokasi bernama Welamo di mana mereka disuruh berdiri dalam lubang yang muncul akibat tanah longsor, dan mereka kemudian dieksekusi oleh tentara dan anggota Hansip.³⁷ Komisi mengumpulkan daftar nama 54 korban yang dieksekusi di Caraubalo.⁷

59. Pada 17 September tentara Indonesia mendekati sekelompok besar penduduk sipil di Kraras yang melarikan diri ke desa tetangga Buicaren. Desa itu dikepung dan mereka yang dari Kraras ditahan. Penduduk laki-laki dipisahkan dari penduduk perempuan dan diberi tahu bahwa mereka akan diarak ke Kraras di bawah pengawasan militer untuk membawa makanan. Menurut bukti yang diterima Komisi antara enam dan delapan tentara Indonesia dan dua Hansip Timor-Leste menyertai beberapa puluh penduduk laki-laki menuju Sungai Wetuku di sebuah daerah yang dikenal sebagai Tahuben. Mereka kemudian ditembak. Hanya empat orang yang hidup dari pembantaian tersebut. Laporan mengenai jumlah korban yang terbunuh di Tahuben beragam, dari yang terendah, 26, sampai yang tertinggi 181.⁸ Komisi menerima nama 141 korban, semuanya laki-laki.⁹

Pelanggaran ekonomi dan harta benda —kerusakan sampingan atau strategi terencana?

60. Menurut hukum perang, harta benda penduduk dilindungi dari serangan.⁵ Kerusakan tidak langsung kepada objek-objek sipil diperbolehkan hanya kalau tidak bersifat berlebihan dibandingkan keuntungan konkret militer.³⁸

61. Informasi yang masuk ke Komisi menunjukkan bahwa perusakan dan pencurian harta milik itu sendiri adalah tujuan utama militer, dan bukan efek sampingan serangan tersebut. Komisi menerima pernyataan mengenai 1.256 kasus pembakaran dan penghancuran rumah, penghancuran ternak dan tanaman pangan, pencurian dan perampokan harta benda. Meski banyak dari perusakan ini terjadi karena serangan-serangan membabibuta, terdapat cukup banyak bukti bahwa penduduk sipil yang dicurigai mendukung kemerdekaan dengan sengaja dijadikan sasaran ABRI/TNI dalam pelanggaran hak ekonomi, pada periode konflik

.....
* Daftar ini ditulis secara menyeluruh dalam Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.

† Wawancara CAVR dengan: António Soares, (tanpa tanggal) yang mengutip 79 terbunuh; Miguel Viana, Viqueque, 17 Juli 2003, yang mengutip 181 terbunuh; Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004, yang mengutip 143; Manuel de Jesus Pinto, Buicaren, Viqueque, 20 Maret 2004, yang berkata dia menghitung 82 mayat.

‡ Daftar korban dari pembantaian ini juga dicantumkan secara menyeluruh di Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.

§ Artikel 52 Protokol tambahan Konvensi Jenewa, yang diakui mencerminkan hukum adat, lihat J. Henckaerts dan L. Doswald-Beck, *ICRC's Customary International Humanitarian Law, Vol I: Rules*, (2005) hal 25-26.

yang berlainan dari masa-masa awal invasi sampai perusakan setelah Jajak Pendapat pada September 1999.

62. Analisa pernyataan yang diberikan kepada Komisi menunjukkan bahwa pelanggaran hak milik dan ekonomi penduduk sipil selalu disertai dengan pelanggaran langsung lain terhadap penduduk sipil, seperti penangkapan, penahanan, penyiksaan, atau pembunuhan.

63. Pelanggaran atas hak ekonomi dan harta benda adalah bagian tak terpisahkan dari kebijakan militer Indonesia selama periode ini. Pelanggaran seperti ini digunakan untuk sejumlah alasan, termasuk hukuman, penghancuran sumberdaya, dan penerapan suatu sistem di mana kolaborator akan diberi penghargaan material dengan mengalihkan secara paksa harta benda milik lawan-lawan politik kepada mereka.

64. Sifat dan skala perusakan harta benda warga sipil dan pencurian dan perampasan selama invasi dan setelahnya menunjukkan kesamaan yang mencolok dengan kejadian-kejadian September 1999 ketika kebijakan 'bumi hangus' membuat TNI dan milisi binaannya membakar dan menghancurkan kira-kira 60.000 rumah dan sebagian besar infrastruktur pemerintah di Timor-Leste hanya dalam waktu beberapa minggu.³⁹

1975-1977

65. Komisi mengumpulkan bukti pencurian dan perusakan harta benda yang disengaja oleh tentara Indonesia sejak awal invasi. Seorang mantan anggota UDT yang bergabung dengan pasukan partisan Timor-Leste yang membantu ABRI/TNI selama invasi skala besar, Rui Emeliano Teixeira Lopes, menggambarkan perampasan yang dilakukan oleh tentara Indonesia:

Pada pagi hari tanggal 7 Desember 1975, Kopassus [waktu itu masih disebut RPKAD], Ranger, Kujang, Kostrad, dan Marinir mendarat di Dili. Kami hanya berada di dalam kapal. Ketika itu kami melihat ada api yang menjalar dan ada tembak-menembak tetapi kami tidak mendarat karena mereka tidak membutuhkan bantuan kami. Ketika kami menuju Baucau, ABRI membawa mobil dan koper orang kemudian dimuat ke dalam kapal yang akan kami tumpangi menuju Baucau. Melihat hal ini kami tidak suka. Kita berperang atau merampok barang orang. Perampokan semacam ini bukan hanya terjadi di Dili [dan Baucau], tetapi juga terjadi di Balibó dan Rumah Sakit Maliana.⁴⁰

66. Anggota partisan dituduh melakukan perusakan dan perampasan secara luas di Baucau.⁴¹ Cerita yang sama juga diberikan di Distrik Liquiçá,⁴² Ermera,⁴³ Baucau,⁴⁴ Lautém,⁴⁵ dan Bobonaro selama periode ini.⁴⁶

67. Setelah invasi awal, pasukan Indonesia berupaya melakukan konsolidasi dan memperluas penguasaan teritorial mereka. Melalui lokakarya Profil Komunitas, termasuk dari komunitas di Distrik Bobonaro (di Atabae dan Lolotoe), di Aileu, di

Baucau (di Baguia, Quelicai, Venilale, Vemasse) dan di Viqueque (di Lacluta, Ossu, Uato Carbau, Uaimori), Komisi menerima laporan tentang pencurian dan perusakan harta benda dari seluruh penjuru Timor-Leste selama gerakan maju ABRI/TNI. Setelah menguasai wilayah baru, pasukan ABRI/TNI secara teratur merampas atau menghancurkan harta benda, sehingga secara efektif mengambalalih dan membuat pemilik dan penghuni rumah kehilangan rumah. Rumah dan harta-benda lain dibakar, tanaman yang belum dipanen dihancurkan, dan sejumlah besar hewan ternak dibantai. Di beberapa tempat, *uma lulik* atau (rumah adat) serta seluruh isinya dihancurkan.⁴⁷ Perusakan semena-mena semacam ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk menghancurkan budaya dan identitas orang Timor-Leste.

68. Di banyak wilayah, penduduk sipil lari ke gunung dan hutan sekitar sebelum pasukan Indonesia tiba. Dengan harta penduduk ditinggal tidak terjaga, ABRI/TNI leluasa menghancurkan atau mencuri harta benda apa saja yang mereka inginkan.

69. Praktik-praktik seperti ini terus berlangsung tanpa henti selama tahun-tahun awal pendudukan. Militer Indonesia secara terbuka mengakui perilaku ini sebagai bagian dasar praktik militer:

Operasi Pamungkas V pada tanggal 6-7 Maret 1978 yaitu untuk membebaskan rakyat di SAS MAUBU yang dijaga oleh GPK. Dengan kekuatan 2 Ki [kopi] bersama Hansip dan Danpur-12, hasil yang diperoleh adalah 3 orang rakyat menyerah, 8 rumah dibakar, dan 2½ hektar kebun jagung dimusnahkan.⁴⁸

70. Dalam serangan ofensifnya, ABRI/TNI dibantu sejumlah pasukan binaannya, termasuk Partisan, dan kemudian struktur pertahanan sipil seperti Hansip dan kelompok milisi seperti Halilintar di Distrik Bobonaro. Komisi menerima berbagai laporan tentang keterlibatan kelompok-kelompok binaan ini dalam pencurian harta benda, baik bekerjasama dengan ABRI/TNI maupun sendiri-sendiri.

71. Komisi menerima berbagai laporan tentang pencurian ternak dan hasil panen. Selain itu, barang-barang bernilai, seperti *tais* (kain ikat), manik-manik, dan uang perak juga dicuri. Domingos da Costa da Silva dari Fatuberliu (Manufahi), menceritakan kepada Komisi tentang pencurian barang-barang tradisional berharga dalam jumlah besar:

Pada tahun 1976 kami lari ke hutan sampai tahun 1978 dan sembunyi di sebuah lokasi bernama "Orboa" Aldeia Orlara. Pada suatu saat datang sekelompok orang Hansip dengan pimpinan L1, para rombongan datang dan menangkap adik saya bernama João da Costa dengan memukul dan menarik dia seperti binatang. Selain itu para pelaku mengambil semua harta milik kami berdua di antaranya Morten 15 buah, Belak tujuh buah, Kaibauk tujuh buah, fucador 15 buah, osan manu liras 30, kalung 25, sasaki 10, loku liman 2, buti

liman 10, sisir dari emas 4, dan murak bulu ayam 2 buah'. Barang-barang tersebut di atas dibawa kabur semua oleh para pelaku, sedangkan kami ditinggalkan dalam keadaan babak belur.⁴⁹

72. Skala laporan kepada Komisi tentang perampasan dan pencurian yang terus merajalela oleh tentara Indonesia menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut seharusnya diketahui dan didukung oleh pejabat militer senior. Tentu saja, penggunaan bahan makanan hasil curian meringankan beban persediaan makanan yang penting bagi pasukan Indonesia. Ternak yang didapat juga memberi peluang peningkatan pendapatan bagi anggota ABRI/TNI dari generasi ke generasi. Militer Indonesia menggunakan harta benda milik penduduk sipil Timor-Leste sebagai bagian penting untuk mendukung operasi militer mereka. João Pinto Dias menceritakan kepada Komisi:

Pada 1976, saya punya 12 kuda. Komandan L2 [orang Timor-Leste] dan anak buahnya mengambil kuda-kuda saya. Beberapa ditembak mati, beberapa dimakan, dan beberapa dijual. Saya punya 40 kerbau lebih, tetapi Komandan L2 dan L3 [orang Timor-Leste] menembak beberapa kerbau itu dan sisanya mereka jual di Batugade kepada orang-orang dari Atambua.⁵⁰

73. Pencurian harta benda dan perusakan juga kerap dilakukan setelah pembunuhan penduduk sipil. António Soares menceritakan kepada Komisi tentang pembunuhan pamannya, pembakaran rumahnya, dan pencurian harta benda oleh anggota Hansip di Esa-isi, Ossu (Ossu, Viqueque):

Para hansip yang dipimpin oleh L18 bersama kedua orang pengikutnya, masing-masing bernama L4 dan L5 melakukan patroli ke Esa-isi [Ossu, Viqueque]. Mereka membunuh Cristovão dan membakar juga rumah serta mengambil ternak mereka berupa kerbau 40 ekor, kuda 31 ekor, dan kambing 58 ekor serta 5 lumbung padi.⁵¹

74. Jacinto Olo Mau mengatakan bahwa pada 1975 ABRI/TNI dari Batalion 501 menyerang Lahomea [Maliana, Bobonaro] dan membunuh orang tuanya, Bere Soro dan Bui Bere. Setelah keduanya tewas dan rumah dalam keadaan kosong, tentara dari Batalion 501 mengambil kesempatan menjarah harta benda korban. Jacinto Olo Mau mengatakan kepada Komisi:

Setelah kedua orangtua saya dibunuh dan rumah kosong, pelaku menggunakan kesempatan untuk masuk dan mengambil semua

.....
* *Morten*: kalung yang dibuat dari biji batuan berwarna kuning; *fucador*: kalung tradisional, biasa dipakai bersama *morten*; *belak*: lempengan timah berbentuk bundar yang digantung di leher dengan benang yang kuat; *Kaibauk*: hiasan di kepala berbentuk seperti tanduk kerbau yang terbuat dari timah atau emas yang ditempa tipis; *Osan manu liras*: koin timah antik dari Portugis; *Loku liman*: gelang pada lengan atas yang terbuat dari emas atau timah; *Buti liman*: gelang tipis dari timah; *murak bulu ayam*: pernik dari bulu ayam.

*barang-barang milik, setelah itu mereka membakar rumah tersebut serta mayat kedua korban di dalam.*⁵²

75. Pencurian ternak dan penghancuran tanaman pangan menimbulkan akibat langsung, karena penduduk di banyak daerah mengalami kekurangan pangan yang parah, yang mengakibatkan kelaparan di mana-mana. Laporan tentang kelaparan sebagai akibat perusakan yang dilakukan oleh ABRI/TNI diterima dari sejumlah daerah termasuk Cailaco dan Lolotoe (Bobonaro) dan Zumalai (Covalima). Alfredo Moniz Soares merenungkan hal ini di hadapan Komisi:

*Pada tahun 1977, saat pasukan TNI melakukan penyerangan, dan karena tidak ada kesempatan untuk mencari makanan sehingga banyak keluarga saya yang meninggal dunia karena kekurangan makanan dan obat-obatan. Selain itu, para pelaku [ABRI] juga melakukan pembakaran rumah dan perampasan terhadap ternak-ternak kami.*⁵³

1978-1979

76. Ketika banyak penduduk sipil turun gunung dan menyerahkan diri kepada militer Indonesia pada 1977-78, mereka pada umumnya tidak diizinkan langsung pulang ke daerah asal mereka. Mereka ditahan di kamp-kamp sementara, banyak yang tetap ditahan di pusat penahanan ABRI/TNI atau desa-desa pemukiman selama bertahun-tahun (lihat Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan). Saat mereka pulang ke daerah asal mereka, banyak yang menemukan desa-desa dan rumah mereka sudah dijarah dan dibakar. Meski basis Fretilin/Falintil sudah dihancurkan dan bentuk resistansi bersenjata sudah berubah secara fundamental, perang belum selesai dan perang ini tetap punya dampak yang mendalam di segala bidang kehidupan penduduk sipil. Penduduk sipil tidak lagi tinggal bersama resistansi bersenjata di pedalaman, tetapi selama periode ini, mereka ditahan dalam kondisi yang dijaga ketat oleh militer Indonesia yang bertujuan agar penduduk sipil tidak bisa melakukan hubungan dan memberi dukungan kepada pejuang Resistansi. Pengawasan, pengumpulan informasi, dan kontrol ketat gerakan penduduk sipil merupakan realitas setiap hari bagi sebagian besar penduduk sipil di kamp-kamp yang dikuasai ABRI/TNI. ABRI/TNI tetap menghancurkan tanaman pangan dan mencuri harta benda penduduk sebagai bentuk hukuman, intimidasi, dan oportunistik ekonomi. Banyak orang yang ditahan di kamp menjadi sasaran pemukulan dan pelanggaran fisik lainnya oleh pasukan bersenjata Indonesia.⁵⁴

77. Diketahuinya hubungan masa lalu seseorang dengan Fretilin selalu menyebabkan orang tersebut menjadi sasaran militer Indonesia. Orang Timor yang bersekutu dengan pasukan pendudukan juga dapat mengambil kesempatan dari situasi ini. José António menyatakan kepada Komisi bahwa mantan anggota UDT mengambilalih tanahnya selama 1979, di Beikala (Hatu Udo, Ainaro), karena latarbelakangnya sebagai anggota Fretilin.⁵⁵ Deponen lain mengatakan kepada

Komisi bahwa dia ditangkap ABRI/TNI pada Maret 1979, disiksa berkaitan dengan aktivitas Fretilin, dan kemudian dipaksa menyerahkan perkebunan kopinya.⁵⁶ Orang-orang lainnya terus menjadi sasaran karena dicurigai memiliki hubungan dengan pejuang Resistansi yang masih berada di hutan.

78. Laporan tentang pencurian dan perampasan harta benda oleh pasukan pendudukan Indonesia dari orang-orang yang telah menyerahkan diri diterima dari Distrik Bobonaro,⁵⁷ Baucau (di Subdistrik Laga,⁵⁸ Vemasse,⁵⁹ Quelicai,⁶⁰ Baguia⁶¹), Manufahi,⁶² Manatuto,⁶³ Covalima,⁶⁴ Ermera,⁶⁵ Viqueque,⁶⁶ dan Oecussi.⁶⁷ Dalam beberapa kasus tindakan tersebut diikuti dengan pemukulan dan penyiksaan.⁶⁸

79. Di Lautém, upaya baru ABRI/TNI pada 1979 untuk mencari pasukan Fretilin/Falintil mengakibatkan lebih banyak kematian penduduk sipil.⁶⁹ Maria Alves menyerahkan diri kepada militer Indonesia pada 1979 di kota lama Fatuberliu (Fatuberliu, Manufahi). Dia menceritakan kepada Komisi tentang penghancuran harta bendanya.

Pada tahun 1979, saya menyerah di Fatuberliu Lama. Kemudian saya disuruh oleh TNI dan Hansip L6 dan L19 untuk membangun rumah dan membuat sawah. Setelah membangun rumah dan membuat sawah kemudian saya disuruh untuk pindah lagi ke Sukaer Laletek oleh camat L7 dan TNI, lalu tanaman-tanaman yang saya tanam seperti, pepaya, ubi, dihancurkan semua dan rumah yang saya bangun juga dibakar semua.⁷⁰

Dekade 1980-an

80. Menjelang akhir 1979, hanya ada beberapa lokasi di beberapa distrik yang masih berada di bawah kekuasaan Fretilin/Falintil. Pada awal dekade 1980-an, sementara beberapa warga sipil tetap berada di kamp-kamp pemukiman di bawah kendali langsung Indonesia, banyak penduduk sipil yang sudah kembali ke rumah mereka. Dalam periode ini, ABRI/TNI mampu membangun kapasitas teritorial yang memungkinkan adanya pos-pos militer di desa-desa di seluruh wilayah ini. Penduduk sipil hidup di bawah pengawasan ketat dari ABRI/TNI dan sekutu mereka dari Timor-Leste seperti Hansip dan Babinsa (lihat Bagian 4: Rezim Pendudukan).

81. Jumlah pelanggaran sosial dan ekonomi yang dilaporkan kepada Komisi jauh lebih sedikit dalam periode ini dibanding jumlah laporan selama empat tahun sebelumnya. Antara 1980 dan 1989, operasi-operasi ABRI/TNI ditujukan untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan Fretilin/Falintil, dan sering terkonsentrasi pada wilayah tertentu negeri ini untuk melancarkan operasi ini.

82. Pada pertengahan 1981, militer Indonesia melancarkan Operasi Kikis*, seperti yang dibahas pada bagian mengenai serangan militer Indonesia terhadap penduduk dan sasaran sipil, di atas. Komisi menerima laporan bahwa selama operasi ini, ABRI/TNI dan anggota Hansip tetap membakar rumah, mencuri ternak dan harta benda, dan menghancurkan tanaman pangan dan bahan makanan lainnya.⁷¹ Komisi, misalnya, menerima 43 laporan mengenai rumah penduduk sipil yang dibakar di Desa Mauchiga (Hato Bulico, Ainaro) antara 20 dan 24 Agustus 1982 oleh ABRI/TNI dan anggota Hansip.

83. Setelah Indonesia mulai mengonsolidasikan kekuasaan mereka atas wilayah ini, maka Indonesia mulai memfokuskan tindakan dan perhatiannya pada lokasi, komunitas, dan individu tertentu yang dicurigai berhubungan dengan Resistansi. Upaya militer Indonesia untuk menumpas aktivitas klandestin yang mendukung Resistansi berakibat pada intimidasi dan penindasan di mana-mana. Di seluruh negeri, penangkapan, pemukulan, dan penyiksaan berlanjut disertai dengan pencurian dan perusakan harta benda.⁷²

84. Ketika ABRI/TNI berupaya menguasai penduduk sipil yang telah kembali ke daerah asal mereka, mereka sangat mengandalkan orang-orang Timor-Leste yang mereka bina seperti Hansip dan Babinsa. Situasinya sangat represif bagi komunitas penduduk sipil dan kadang-kadang muncul ketegangan antara ABRI/TNI dan orang Timor-Leste binaan mereka. Beberapa pemberontakan internal oleh orang-orang binaan ini mulai muncul pada awal dekade 1980-an, yang diikuti oleh aksi balas dendam yang kejam terhadap penduduk sipil oleh ABRI/TNI. Pada Agustus 1983, setelah desersi massal anggota Hansip dan Ratih dari ABRI/TNI di Tutuala (Lautém), militer Indonesia melakukan balas dendam dengan membantai puluhan ternak milik keluarga orang-orang yang membangkang.⁷³

85. Hukuman kolektif yang diberikan ABRI/TNI terhadap penduduk sipil di Kraras (Viqueque, Viqueque) pada September 1983, yang dilaporkan pada bagian mengenai serangan Indonesia terhadap penduduk dan sasaran sipil (paragraf 56 – 59), juga mencakup tindakan penghancuran harta benda. Rumah-rumah dibakar dan ternak dibunuh oleh anggota militer Indonesia sebagai balasan atas pemberontakan Hansip dan Ratih dari Timor-Leste. Dampak sosial dan ekonomi dari aksi ini dan pembantaian skala besar penduduk laki-laki di desa tersebut, menyebabkan kerugian berkelanjutan kepada masyarakat ini sampai sekarang.

86. Di seluruh negeri sepanjang dekade 1980-an tujuan operasional militer Indonesia adalah untuk mematahkan jaringan klandestin antara Fretilin/Falintil dan penduduk sipil yang mendukung mereka. ABRI/TNI dengan bantuan anggota

* Di Timor-Leste, ini dikenal dengan nama Operasi Kikis. Ini nama pendek untuk taktik militer yang dikenal dengan nama Operasi Saber Kikis Baratayudha (dari nama perang di wayang kulit Jawa), juga dikenal dengan nama operasi 'Pagar Betis'. Ini merupakan teknik menggunakan puluhan ribu penduduk sipil sebagai perisai hidup yang bergerak di depan pasukan ABRI/TNI dalam suatu upaya besar-besaran dan terkoordinasi untuk menjepit pasukan Fretilin/Falintil. Teknik ini pertama dipakai selama pemberontakan Darul Islam pada dekade 1950-an. Lihat misalnya Ken Conboy, *KOPASSUS, Inside Indonesia's Special Forces*, Equinox Publishing (Asia), Jakarta, 2003, hal.297-8. Lihat juga Bagian 3: Sejarah Konflik; Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan.

milisi memaksa penduduk sipil untuk terlibat dalam operasi Curlog,* yang bertujuan menghancurkan persediaan bahan makanan agar pasukan Fretilin/Falintil kelaparan.⁷⁴ Penduduk sipil menjadi sasaran, rumah mereka dibakar dan harta benda mereka diambil.⁷⁵ Lebih jauh, ABRI/TNI juga merampas persediaan bahan makanan penduduk (lihat Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan).⁷⁶

Dekade 1990-an

87. Selama dekade 1990-an, meskipun ABRI/TNI mempertahankan kehadirannya yang besar di Timor-Leste, ABRI/TNI tidak lagi terlibat dalam operasi militer skala besar. Strategi Resistansi telah berubah dari konflik bersenjata langsung dengan ABRI/TNI ke diplomasi internasional dan perlawanan kota bertumpu pada pertumbuhan gerakan pemuda. Operasi ABRI/TNI terus ditujukan terutama pada penduduk sipil yang dicurigai terlibat aktivitas klandestin yang mendukung Resistansi. Operasi ini sering didukung oleh Hansip dan organisasi paramiliter Timor-Leste lainnya yang dibentuk selama periode ini (lihat Bagian 3: Sejarah konflik; Bagian 4: Rezim pendudukan). Polisi anti huru-hara Indonesia, Brimob, juga memainkan peranan sangat aktif dalam menekan pembangkangan pada periode ini.

88. Strategi ABRI/TNI ini selalu melibatkan kekerasan terhadap penduduk sipil. Seperti pada dekade 1970-an dan 1980-an, Komisi menerima berbagai laporan tentang penghancuran rumah dan harta benda lain, serta pencurian dan pemerasan dengan ancaman kekerasan. Komisi juga menerima sejumlah laporan tentang keterlibatan kepolisian Indonesia dalam penganiayaan kejam, perusakan harta benda, dan pemerasan selama periode ini.

89. Seperti pada periode-periode sebelumnya, pencurian dan perusakan harta benda selama periode ini paling tepat dipahami sebagai suatu bentuk hukuman yang disengaja. Rumah-rumah dibakar apabila pemiliknya dicurigai mendukung atau bersimpati kepada pasukan Fretilin/ Falintil.⁷⁷ Sebagai contoh, seorang penduduk Ainaro menjelaskan kepada Komisi bahwa tentara ABRI/TNI membakar rumahnya pada November 1991 menjelang pembantaian Santa Cruz, karena ia dicurigai menyimpan bendera RDTL.⁷⁸

90. Seorang deponen lain dari Liquiçá menceritakan kepada Komisi bahwa dia ditangkap karena memiliki bendera Fretilin, dan hanya dibebaskan setelah istrinya memberikan uang sebesar Rp300.000,00 dan tujuh koin perak kepada seorang komandan ABRI/TNI.⁷⁹ Komisi menerima sejumlah pernyataan dari berbagai wilayah negeri ini, yang mengungkapkan bagaimana pemerasan yang dilakukan militer dan polisi menjadi hal yang umum selama masa ini. Sering orang ditahan dan hanya dibebaskan apabila mereka mampu membayar petugas. Keluarga sering diwajibkan membayar untuk pembebasan orang yang mereka kasahi, dan pembayaran dilaporkan berkisar antara Rp100.000,00 dan Rp1.800.000,00.⁸⁰

* Curlog artinya Hancur Logistik. Tujuannya menghancurkan segala jenis tanaman pangan yang bisa dipakai Falintil. Ini membatasi persediaan makanan Falintil dan penduduk sipil karena tanaman pangan dihancurkan (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik; Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan).

91. Praktik-praktik seperti ini pada dasarnya bersifat oportunistik dan sangat tergantung pada petugas yang terlibat. Aksi-aksi ditujukan pada jaringan aktivis klandestin. Di Baucau, tentara ABRI/TNI merampas harta benda dan barang berharga penduduk dan memeras penduduk sipil yang dituduh bekerjasama dengan Fretilin/Falintil.⁸¹

92. Di Dili, setelah pembantaian Santa Cruz pada November 1991, ABRI/TNI mengeledah rumah-rumah di seluruh Dili untuk mencari para demonstran yang melarikan diri dari tempat penembakan. Komisi menerima pernyataan yang memberi kesaksian bahwa mereka yang kedatangan menyembunyikan para demonstran, atau yang memiliki buku-buku atau bahan-bahan prokemerdekaan, rumahnya dihancurkan.⁸²

93. Laporan serupa mengenai kekerasan, pembakaran dan pemerasan selama dekade 1990-an berhasil dihimpun di Ermera. Berbagai unit militer, termasuk Linud 700 (Lintas Udara), ditunjuk sebagai pelaku.⁸³

94. Serangan Falintil terhadap ABRI/TNI selama periode ini pada umumnya terbatas pada saat-saat strategis, dengan tujuan mendapatkan efek psikologis paling besar sebagai peringatan akan keberadaan dan kemampuan mereka, atau efek internasional untuk mengingatkan bahwa konflik masih berlanjut (lihat Bagian 5: Resistansi: Struktur dan strategi). Bila serangan benar-benar terjadi, praktik penghukuman atas nama (penghukuman perwakilan) atau hukuman kolektif oleh militer Indonesia terhadap penduduk sipil secara rutin dilancarkan. Pada 9 November 1998, Falintil menyerang Koramil Alas (Manufahi). ABRI/TNI melancarkan operasi besar-besaran dalam upaya menangkap para pelaku serangan tersebut. Selama operasi ini, penduduk sipil dibunuh, ditahan, dan diperkosa, serta harta benda mereka dihancurkan (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan; Bab 7.7: Kekerasan seksual).⁸⁴ Komisi juga menerima kesaksian José Tilman, seorang penduduk sipil, yang hadir selama penghancuran harta benda oleh ABRI/TNI pada waktu serangan itu:

Pada tanggal 12 November 1998 L12 dan L13 (keduanya orang Timor) dan tentara Koramil lainnya membakar rumah penduduk di Lurin. Mereka mulai dari Kulutetuk dan berakhir di Hasbot. Di Natarwaen, kerusakan meliputi alat-alat upacara tradisional dan harta pribadi. Para penyerang juga menjarah barang-barang keramat, seperti patung orang suci. Saya bersama dengan tentara di Natarwaen. Pertama-tama, mereka membakar rumah Rémigio, kemudian rumah-rumah lainnya... Sebelum itu, mereka menyuruh penduduk desa meninggalkan desa dan menahan mereka di bangunan sekolah dasar (SD Inpres Kota Alas), sekitar 10 meter dari Kantor Koramil 02.⁸⁵

* José Tilman berada di Soe (Timor Barat, Indonesia) ketika dia membuat pernyataan kepada Komisi.

Penghancuran pada 1999

95. Dengan jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, ruang politik di Timor-Leste tampaknya terbuka pada semester kedua tahun tersebut. Berbagai pawai dan seruan untuk referendum mengenai status politik wilayah ini, yang sebelumnya belum pernah ada, berjalan tanpa mendapat halangan dari militer atau penguasa Indonesia. Meski demikian, 'Musim Semi di Dili' ini tidak berlangsung lama. Laporan mengenai pengurangan jumlah pasukan TNI ternyata tidak benar, dan pada akhir 1998 TNI dilaporkan membentuk jaringan milisi di seluruh wilayah ini. Program ini dijalankan dengan cepat di awal-awal bulan 1999 pada saat Indonesia, Portugal, dan PBB merundingkan perincian tindakan penentuan nasib sendiri di Timor-Leste (lihat Bagian 3: Sejarah konflik; Bagian 4: Rezim pendudukan).

96. Dengan penandatanganan Kesepakatan 5 Mei dan pengumuman Jajak Pendapat, CNRT (*Concelho Nacional da Resistência de Timor-Leste*, atau Dewan Nasional Resistansi Timor-Leste) dan organisasi pelajar mulai melakukan organisasi secara terbuka di seluruh wilayah Timor-Leste sebagai persiapan untuk referendum mengenai masa depan Timor-Leste.

97. Perekrutan, baik dipaksa maupun sukarela, penduduk sipil ke dalam milisi dukungan TNI meningkat pesat pada Bulan-bulan awal 1999. Bersama TNI dan polisi Indonesia, mereka memulai kampanye teror dengan tujuan mengintimidasi penduduk Timor-Leste untuk mendukung integrasi dengan Indonesia. Tindakan-tindakan kekerasan skala besar dan pola kekerasan dan intimidasi dibahas secara mendalam di beberapa bab di dalam Laporan ini, termasuk Bagian 3: Sejarah konflik, Bagian 4: Rezim pendudukan; Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan, Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan, dan Bab 7.7: Kekerasan seksual. Pelanggaran ekonomi dan harta benda juga umum diterapkan dalam program teror dan intimidasi ini. Semua ini terjadi sebelum Kesepakatan 5 Mei dan Jajak Pendapat, menjelang referendum, dan dalam kampanye kekerasan setelah pengumuman hasil yang menolak integrasi dengan Indonesia.

98. Analisa kuantitatif dari pernyataan yang diambil oleh Komisi menunjukkan pola-pola pelanggaran hak-hak asasi manusia, intimidasi, dan kekerasan tertentu yang dilakukan oleh TNI dan milisi antara Januari dan Oktober 1999. Secara khusus, pola ini menunjukkan serangan skala besar secara umum terjadi pada periode-periode saat tidak ada kehadiran staf internasional di wilayah ini: misalnya, pada periode Januari - April sebelum Kesepakatan 5 Mei ditandatangani dan staf PBB dan staf internasional lain ditugaskan di wilayah ini; dan pada periode setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat saat sebagian besar orang-orang internasional, termasuk media, sudah pergi atau diungsikan dari wilayah ini, atau terkurung di kantor UNAMET di Dili, yang mengakibatkan seluruh komunitas di distrik terlepas dari pengawasan internasional. Analisa kuantitatif ini juga menunjukkan bahwa penghancuran harta benda oleh TNI dan milisi terjadi di semua distrik, meski tingkat kerusakan berbeda-beda di antara berbagai distrik dan subdistrik (lihat Bagian 6: Profil pelanggaran HAM).

99. Saat Presiden B.J. Habibie membuat pengumuman pada 27 Januari 1999 bahwa rakyat Timor-Leste diperbolehkan memilih masa depan politik mereka, 'Musim Semi Dili' sudah berakhir. Setelah serangan TNI terhadap penduduk sipil di Alas (Manufahi) pada November 1998 dan meningkatnya perekrutan milisi, kekerasan TNI dan milisi semakin kerap terjadi di wilayah ini, sementara perundingan terus berlanjut untuk menyetujui rincian tindakan menentukan nasib sendiri.

100. Pada akhir Maret, perundingan berhenti saat wakil Indonesia kembali dari New York ke Jakarta untuk meminta persetujuan akhir tentang kesepakatan tersebut. Pada April, terjadi peningkatan kekerasan oleh militer Indonesia dan milisi di bawah kekuasaannya, yang ditujukan kepada penduduk sipil. Pembantaian penduduk sipil di Gereja Liquiçá pada 6 April merupakan salah satu serangan paling kejam terhadap penduduk sipil, yang diorganisasi oleh TNI, polisi, dan milisi (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

101. Saat PBB belum tiba di wilayah ini, kekerasan ini diorganisasi secara terbuka, bahkan terjadi demonstrasi massal pada 17 April di depan kantor pemerintah di pantai Dili yang dihadiri oleh pemimpin senior milisi dan TNI. Komisi telah mencermati dokumen film tentang demonstrasi dan melihat kehadiran anggota TNI dan pemimpin milisi seperti Eurico Guterres dan João Tavares. Setelah serangan, milisi berpawai sekeliling kota dengan truk dan sepeda motor dan mengintimidasi penduduk sipil. Mereka menyerang dan membantai pengungsi yang berlindung di rumah Manuel Carrascalão di pusat kota.

102. Selama penyerangan ini, pada 17 April, TNI dan milisi juga menghancurkan rumah milik Filomena da Cruz, sekretaris zona gerakan klandestin.⁸⁶ Kantor satu-satunya surat kabar di wilayah ini, *Suara Timor Timur*, juga dihancurkan yang tampaknya merupakan tindakan balas dendam dan intimidasi karena surat kabar yang biasanya prointegrasi ini membuat laporan yang relatif terbuka tentang seruan untuk referendum mengenai masa depan wilayah ini (lihat Bagian 3: Sejarah konflik).

103. Di Liquiçá, militer dan anggota milisi Besi Merah Putih (BMP) juga terlibat dalam serangkaian pembakaran rumah, penjarahan, dan pencurian sejak awal 1999.⁸⁷

104. Cerita yang sama tentang keterlibatan langsung militer dalam serangan dan intimidasi terhadap penduduk sipil selama periode ini juga dilaporkan ke Komisi di berbagai bagian yang berbeda di negeri ini. Laporan mengenai kekerasan seperti ini selama periode ini diterima dari distrik Bobonaro,⁸⁸ Baucau,⁸⁹ Viqueque,⁹⁰ Manufahi,⁹¹ Covalima,⁹² dan Ermera.⁹³ Seorang mantan komandan milisi Darah Merah Putih, yang beroperasi di salah satu subdistrik di Ermera selama periode ini, menceritakan kepada Komisi:

Pada bulan April 1999, Dandim Kodim 1637 di Ermera yang bernama L20 memberikan tujuh pucuk senjata, satu truk Fuso/Hino, dua buah mobil kijang dan satu buah mobil Taft kepada saya. Pada saat itu pula saya mempunyai 200 orang anggota yang dibentuk dengan tujuan

untuk membunuh orang-orang prokemerdekaan di Hatolia. Saya dan 200 anggota menyerang Hatolia...Kami membakar rumah- penduduk di aldeia Kukara, Desa Manusae Kraik. Masyarakat setempat meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri.⁹⁴

105. Banyak orang lari dari rumah mereka di seluruh wilayah ini karena takut serangan-serangan seperti ini, membuat rumah dan harta benda mereka mudah dihancurkan dan dijajah (lihat Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan).

106. Daerah kantong Distrik Oecussi terutama sangat rawan karena dikelilingi wilayah Indonesia dan terpisah dari wilayah Timor-Leste lainnya. Meski milisi Sakunar di distrik ini merupakan salah satu milisi terakhir yang dibentuk TNI, pada April 1999, milisi ini terbukti merupakan kelompok yang paling kejam. Sejumlah besar penduduk laki-laki dewasa direkrut ke dalam milisi ini, dengan menggunakan berbagai bentuk kekerasan seperti penangkapan, penahanan, intimidasi, penyiksaan, dan penghancuran harta benda untuk menakut-nakuti penduduk sipil. Seperti di distrik lain, milisi segera mulai membakar dan menjarah rumah-rumah.⁹⁵ Mereka yang menjadi sasaran termasuk penduduk pada umumnya, serta secara khusus pendukung prokemerdekaan, aktivis, dan pemimpin CNRT. Lebih jauh, anggota milisi yang ragu-ragu juga dijadikan sasaran oleh TNI dan pendukung pro-otonomi. Komisi juga menerima laporan tentang pendukung prokemerdekaan yang dipaksa membakar rumah pemimpin mereka.⁹⁶

107. Setelah pengumuman Kesepakatan 5 Mei pendukung pro-otonomi menjadi marah dan secara terbuka mengancam akan melakukan teror, pembunuhan, penahanan, pemerkosaan, dan penghancuran rumah dan harta benda. Dalam beberapa hari, TNI dan milisi melakukan serangan gabungan terhadap penduduk sipil yang dicurigai mendukung gerakan prokemerdekaan di seluruh distrik di wilayah Timor-Leste.⁹⁷ Dalam sebuah serangan di Atara dan Lasaun (Atsabe, Ermera) pada 16 Mei 1999, SGI dan milisi Tim Pancasila membakar rumah, menghancurkan tanaman pangan, dan menjarah harta benda penduduk sipil di kedua desa.⁹⁸ Beberapa serangan skala besar juga terjadi. Pada 8 Mei, tiga hari setelah pengumuman PBB, sekelompok anggota TNI memimpin lebih daripada 400 anggota milisi dalam sebuah serangan di Desa Tumin (Oesilo, Oecussi) dan membakar rumah, membantai ternak, membunuh sejumlah penduduk sipil, dan memaksa lebih daripada 75 orang untuk pergi ke Desa Imbate (Timor Barat, Indonesia).⁹⁹

108. Dengan penugasan UNAMET pada Juni, bersama dengan satu kontingen besar media masa dan pengamat internasional, skala kekerasan oleh TNI dan milisi pada umumnya berkurang di seluruh wilayah ini. Namun, kekerasan meningkat di tempat-tempat atau periode tertentu. Hal ini terutama terjadi menjelang Jajak Pendapat. Misalnya, pada Agustus TNI dan kelompok milisi meningkatkan kekerasan di Oecussi, dengan sasaran pemimpin dan pendukung CNRT. Pada pagi hari 28 Agustus 1999, kekuatan gabungan milisi Sakunar dan Besi Merah Putih dari Liquiçá, bersama TNI dan anggota polisi Indonesia, menyerang kantor CNRT di Oecussi, menghancurkan kantor ini, dan membunuh dua pendukung CNRT yang terperangkap di dalam.¹⁰⁰

Pada hari yang sama, serangan gabungan oleh milisi Sakunar, Aitarak, dan Besi Merah Putih, yang bertindak bersama TNI dan polisi Indonesia, mendorong terjadinya penjarahan dan pembakaran rumah di Cruz, Bobometo, Oesilo di Oecussi.¹⁰¹ Tiga hari kemudian, TNI, milisi, dan polisi membakar 120 rumah di Kampung Debaha di Desa Bobometo (Oesilo, Oecussi).¹⁰²

109. Saat mayoritas rakyat Timor-Leste memutuskan menolak opsi otonomi khusus dan memilih merdeka, militer Indonesia bersama milisi melancarkan kampanye bumi hangus yang memaksa lebih daripada 300.000 orang melarikan diri ke pedalaman, dan 250.000 orang ke Timor Barat.¹⁰³ Meski sejumlah orang memilih pergi ke Timor Barat secara sukarela, pada umumnya ini merupakan kampanye teror dan intimidasi yang diorganisasi militer untuk memindahkan penduduk ke luar wilayah Timor-Leste. Di Timor-Leste, militer Indonesia mendukung dan mengorganisasikan operasi besar-besaran untuk menghancurkan harta benda milik pribadi dan milik pemerintah di seluruh wilayah Timor-Leste. Sebagian besar infrastruktur di Timor-Leste juga diratakan dengan tanah, lebih daripada 60.000 rumah diperkirakan hancur termasuk harta benda penduduk, dan ternak dibantai di seluruh wilayah Timor-Leste.¹⁰⁴ Selama Audiensi Rekonsiliasi Komunitas yang difasilitasi Komisi antara 2002 dan 2004 di seluruh wilayah ini, keluhan umum dari para korban penghancuran harta benda ini ialah kemiskinan parah yang terus berlanjut akibat kekerasan ini (lihat Bagian 9: Rekonsiliasi komunitas).

110. Komisi menerima pernyataan dan laporan selama lokakarya Profil Komunitas tentang kekerasan setelah referendum yang dilakukan oleh militer Indonesia dan milisi dari setiap distrik. Banyak dari pernyataan laporan ini menekankan bahwa militer Indonesia dan milisi melancarkan operasi bersama, misalnya di Ermera,¹⁰⁵ Manatuto,¹⁰⁶ Manufahi¹⁰⁷ Baucau,¹⁰⁸ Viqueque,¹⁰⁹ Covalima,¹¹⁰ dan Oecussi.¹¹¹

111. Komisi menerima pernyataan tentang pelanggaran dalam jumlah terbesar selama periode pascareferendum dari Distrik Oecussi. Ratusan penduduk desa dari Subdistrik Oesillo dipaksa milisi Sakunar dan kemudian oleh militer Indonesia untuk membakar rumah-rumah di Desa Bobometo (Oesilo, Oecussi) dan lokasi lain. Pernyataan yang dibuat kepada Komisi menjelaskan bahwa tindakan ini sering terkoordinasi secara rapi dan merupakan operasi besar.¹¹² Seperti di tempat lain, serangan sering melibatkan anggota milisi dengan dukungan polisi dan militer.¹¹³

112. Komisi menerima lebih daripada 200 pernyataan dari Distrik Bobonaro dalam kaitannya dengan kejahatan berkaitan dengan harta benda sepanjang 1999. Banyak dari pernyataan ini memberi penjelasan terperinci mengenai operasi dan serangan gabungan antara milisi dan militer.¹¹⁴

113. Meski pola pembakaran rumah, pembantaian ternak, dan penghancuran bahan makanan mirip dengan periode konflik sebelumnya, skala kerusakan dalam periode singkat ini tidak pernah terjadi. Seperti pada dekade 1970-an

* 110 pernyataan menyebut 117 kasus di mana ABRI/TNI dan kelompok milisi disebut sebagai pelaku kekerasan.

dan 1980-an tidak ada bukti tentang adanya upaya untuk menghindari atau menghentikan pelanggaran ini oleh polisi Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keamanan, sesuai dengan Kesepakatan 5 Mei. Juga tidak ada bukti militer Indonesia mencoba mencegah penghancuran ini setelah diberi tanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dekret keadaan darurat yang dikeluarkan oleh Presiden Habibie pada awal September. Sebaliknya, terdapat banyak bukti bahwa militer Indonesia merupakan pelaku utama dalam pelanggaran ini. Bukti adanya kolusi antara militer dan berbagai kelompok milisi di seluruh wilayah ini jelas dan sangat memojokkan. Laporan-laporan terbaru diperkuat oleh ratusan pernyataan yang diberikan kepada Komisi dari orang-orang yang menyaksikan keterlibatan langsung anggota militer dan polisi dalam kekerasan (lihat Bagian 4: Rezim pendudukan; Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum; Bab 7.3: Pindahan paksa dan kelaparan; Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan; Bab 7.7: Kekerasan seksual; Bagian 8: Tanggung jawab dan pertanggungjawaban).

114. Tuduhan kolusi dan keterlibatan langsung militer dalam kekerasan juga diperkuat oleh pernyataan yang diberikan kepada Komisi dari mantan anggota milisi, serta pernyataan dan kesaksian dari mantan anggota milisi yang dibuat dalam Audiensi Rekonsiliasi Komunitas di seluruh negeri.¹¹⁵ Lebih jauh, laporan Profil Komunitas yang dikumpulkan oleh Komisi dari lokakarya yang diselenggarakan di desa-desa di Timor-Leste juga mencatat keterlibatan militer Indonesia dalam operasi besar-besaran untuk menghancurkan harta benda penduduk di Timor-Leste.¹¹⁶

115. Komisi juga menerima submisi yang memberikan penjelasan terperinci mengenai penjarahan museum nasional di Dili berkaitan dengan ratusan benda-benda budaya dan bersejarah. Sumbisi-submisi tersebut menulis bahwa anggota TNI menyiapkan truk, mengangkut benda-benda bersejarah tersebut, dan membawanya ke Timor Barat, Indonesia, di mana benda-benda itu tersimpan sampai sekarang.*

Penganiayaan terhadap petempur musuh

116. Hukum internasional jelas memberi perlindungan bagi petempur yang tertangkap. Biasanya ketika seorang petempur tertangkap oleh musuh, ia mendapat status Tawanan Perang - *Prisoners of War* (POW). Ini termasuk orang-orang dari salah satu kelompok-kelompok di bawah ini:

- anggota pasukan bersenjata;

.....
* Komisi menerima submisi berdasar wawancara dengan Virgilio Smith, yang pada 1999 menjadi anggota senior CNFT yang bertanggung jawab atas urusan kebudayaan. Virgilio Smith menceritakan bahwa hampir 3.000 benda dan peninggalan budaya dibawa oleh penguasa Indonesia dari museum di Comoro, Dili, pada September 1999 dan belum dikembalikan. [Wawancara dengan Virgilio Smith, 7 Juli 2005 oleh David Hicks, Maxine Hicks, dan Phyllis Ferguson, submisi ke CAVR. Arsip CAVR. Lihat juga Bagian 3: Sejarah konflik.]

- orang-orang yang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan pasukan invasi, dan yang tidak sempat membentuk satuan-satuan yang terorganisasi, tetapi yang membawa senjata secara terang-terangan (kadang disebut *levée en masse*); dan
- pejuang resistansi atau anggota milisi yang menaati aturan tertentu yang mengharuskan mereka membedakan diri dari penduduk sipil.¹¹⁷

Status Falintil

Falintil bukan merupakan pasukan bersenjata suatu negara yang terlibat konflik, dan karena mereka bukan semata-mata penduduk sipil yang secara spontan mengangkat senjata menghadapi pasukan invasi, mereka tidak dapat disebut *levée en masse*. Falintil, karena itu, hanya bisa mendapat status sebagai tawanan perang apabila mereka memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam Konvensi Jenewa Ketiga untuk gerakan resistansi, milisi, dan kelompok-kelompok serupa lainnya.¹¹⁸ Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kelompok yang dimaksud harus dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya (dengan kata lain, kelompok tersebut harus memiliki struktur komando yang efektif)
- Anggota kelompok tersebut harus mengenakan tanda pengenal yang dapat dikenali dari jauh. Tujuan persyaratan ini adalah untuk memungkinkan musuh membedakan anggota kelompok tersebut (sebagai sasaran militer yang sah) dari penduduk sipil (yang bukan sasaran militer yang sah). Karena alasan tersebut, sangat mungkin bahwa menurut ketentuan hukum kebiasaan hal ini diatur dengan persyaratan yang lebih longgar bahwa anggota kelompok ini harus membedakan dirinya dengan warga sipil dengan suatu cara^{*}
- Anggota kelompok tersebut harus membawa senjata secara terbuka; dan
- Kelompok tersebut secara umum harus menjalankan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang

* Pasal 43 (3) Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa 1977. Kelihatannya, persyaratan yang luas ini merefleksikan kebiasaan yang ada sebelum 1977 atau menjadi kebiasaan segera setelah 1977. Lihat Christopher Greenwood, "Customary Law Status of the 1977 Geneva Protocols", dalam Astrid J.M. Delissen dan Gerard J. Tanja (eds), *Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead*, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991, hal.107..

Komisi yakin bahwa anggota Falintil cukup memenuhi persyaratan di atas agar dapat diakui sebagai petempur yang memiliki hak untuk tujuan Laporan ini.

Falintil memiliki struktur komando dan disiplin yang relatif ketat dan ditegakkan, membawa senjata secara terbuka, dan umumnya melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Sejak awal konflik, anggota Falintil mengenakan seragam tentara Portugis. Pada 1978, banyak seragam ini sudah usang, sehingga harus diganti beberapa kali dengan seragam militer lain. Namun demikian kombinasi antara seragam dan tanda pengenal yang ada, serta ciri-ciri khusus lainnya, seperti anggota Falintil mengambil kebijakan khusus dan seragam untuk memiliki rambut yang sangat panjang, membuat mereka sangat mudah dibedakan dari jauh.¹¹⁹

117. Apabila ada ketidakjelasan apakah seseorang bisa mendapatkan status tawanan perang, maka dia harus diperlakukan sebagai tawanan perang sampai statusnya diputuskan oleh pengadilan yang kompeten.¹²⁰

118. Tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi.¹²¹ Mereka tidak boleh disiksa, dibunuh, atau diintimidasi atau dihina.¹²² Mereka harus mendapat makanan dan minuman serta perawatan medis yang diperlukan.¹²³ Mereka harus ditahan di tempat yang jauh dari bahaya serangan selama aktivitas militer berlangsung.¹²⁴

119. Para petempur yang bukan tawanan perang masih berhak atas standar perlakuan tertentu. Di atas segalanya, mereka harus diperlakukan secara manusiawi.^{*} Mereka juga dilindungi hukum hak-hak asasi manusia, yang melarang pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang, dan mendapat jaminan hak-hak atas peradilan yang adil. Lebih jauh, Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa orang-orang yang berada di wilayah pendudukan yang dicurigai melakukan tindakan yang memusuhi kekuatan pendudukan harus diperlakukan secara manusiawi dan berhak atas peradilan yang adil.¹²⁵

120. Komisi mendapatkan salinan dokumen resmi Indonesia yang menjelaskan prosedur interogasi bagi penduduk sipil dan prajurit Falintil yang menyerah atau tertangkap. Dokumen tersebut menyatakan bahwa untuk mendapatkan informasi berkualitas baik, keselamatan tahanan selama interogasi perlu dijamin. Teknik-teknik yang dipakai termasuk meyakinkan para tahanan bahwa ABRI/TNI sadar akan bahaya yang dihadapi para tahanan dari Fretilin/Falintil, sebagai balasan atas informasi sensitif yang diberikan. Dokumen tersebut juga menggarisbawahi

* Lebih khususnya, dengan penerapan Klausula Martens (yang tertuang di Konvensi Den Hague IV tahun 1907 dan sejumlah Konvensi lain), "Prinsip Kemanusiaan" berlaku: lihat Laporan Komisi Hukum Internasional mengenai Hasil Sesi ke-empat puluh enam, 2 Mei – 22 Juli 1994, GAOR A/49/10, pada hal. 317; Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons (1986) Laporan ICJ paragraf 78 dan Pendapat Berbeda Hakim Shahabuddeen.

hal-hal yang harus dihindari selama interogasi, seperti memaksakan keinginan penginterogasi kepada tahanan, penggunaan kekerasan dan ancaman, atau membuat kesimpulan tergesa-gesa.¹²⁶

121. Kenyataannya, para tahanan, dan terutama prajurit Falintil, selalu menjadi sasaran penyiksaan selama interogasi. Beberapa tahanan sengaja dibunuh dan tahanan lain mati karena luka-luka yang dialami selama interogasi. Bab 7.4. dari Laporan ini, tentang Penahanan, penyiksaan dan penganiayaan, memberikan perincian mengenai prosedur-prosedur tersebut dan menyimpulkan bahwa modus operandi interogasi pada dasarnya tidak sah.

122. Selama periode Operasi Seroja oleh militer Indonesia, pada tahun-tahun setelah invasi 1975, paling banyak terjadi penangkapan atau penyerahan diri prajurit Fretilin/Falintil. Militer Indonesia menerapkan operasi khusus untuk mencoba meyakinkan pemimpin senior Fretilin/Falintil untuk menyerah, seperti Operasi Skylight, kadang-kadang disebut dengan Gerakan Skylight (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Lebih jauh, Presiden Soeharto menawarkan amnesti kepada anggota Fretilin/Falintil yang menyerah pada 1977. Kedua inisiatif ini gagal menjamin perlindungan bagi anggota Fretilin/Falintil yang menyerahkan diri atau tertangkap, karena banyak yang disiksa dan dibunuh atau dihilangkan (lihat bagian 3: Sejarah konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan). Hal yang masih tidak mungkin adalah menentukan berapa banyak anggota Fretilin/Falintil yang mengalami perlakuan semacam ini selama tahun-tahun Operasi Seroja pada dekade 1970-an.

123. Pernyataan-pernyataan yang diterima Komisi memberikan penjelasan mengenai perlakuan tentara Fretilin/Falintil yang tertangkap, termasuk penyiksaan dan penganiayaan.¹²⁷ Banyak yang hilang dalam tahanan, tidak pernah terlihat lagi, dan dinyatakan meninggal.¹²⁸ Seiring dengan banyaknya penduduk sipil yang turun gunung setelah operasi militer besar-besaran yang bertujuan menghancurkan basis Fretilin/Falintil sepanjang 1978, militer Indonesia mencoba mengidentifikasi mereka yang dicurigai sebagai anggota Fretilin/Falintil. Mereka juga menginterogasi penduduk sipil untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan Resistansi yang masih tersisa di gunung. Misalnya, komunitas Desa Lifau (Laleia, Manatuto) menjelaskan kepada Komisi bagaimana ABRI/TNI menginterogasi sekelompok orang yang ditangkap di desa mereka. Tiga orang ditemukan sebagai pemimpin Fretilin/Falintil, dan Komisi diberi tahu bahwa mereka dibunuh oleh militer Indonesia.¹²⁹ Istilah seperti 'sekolah lagi' atau 'mandi laut' atau 'pergi berenang' menjadi samaran untuk pembunuhan di luar hukum oleh militer Indonesia.¹³⁰

124. Pada 1980, setelah pemberontakan oleh Resistansi dengan penyerangan atas stasiun pemancar televisi di Marabia di luar Dili, militer Indonesia membalas dendamnya dengan perlakuan brutal terhadap mereka yang dicurigai terlibat Resistansi. Ratusan orang ditahan dan disiksa, dan banyak yang dieksekusi atau dihilangkan (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa;

Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan). Cerita mengenai pelanggaran yang sama terhadap Fretilin/Falintil juga diterima berkaitan dengan Operasi Kikis pada 1981.¹³¹

125. Komisi menerima sejumlah laporan tentang penganiayaan dan juga pembunuhan terhadap prajurit Falintil yang tertangkap pada dekade 1980-an.¹³² Pada 1984, misalnya, pertempuran meletus antara Falintil dan ABRI/TNI di hutan di sekitar Manatuto, di mana tiga prajurit Falintil tertangkap ABRI/TNI dan dibawa ke Dili. Satu prajurit dimasukkan dalam tong yang penuh air selama dua jam, dipaksa tidur dengan pakaian basah, dan dipukuli dengan sebatang kayu di kepala, kaki, dan tangannya setiap malam selama satu minggu.¹³³ Penganiayaan terhadap para petempur dan penduduk sipil terus terjadi selama dekade 1990-an,¹³⁴ yang memperkuat dugaan bahwa perlakuan ABRI/TNI terhadap petempur yang tertangkap melanggar prinsip hukum.

126. Komisi menyadari bahwa karena terbatasnya waktu dan sumberdaya yang dialokasikan untuk kerja Komisi ini, dan keterbatasan akses ke dokumen militer Indonesia, banyak kasus penganiayaan dan pembunuhan pejuang Falintil yang tertangkap atau menyerahkan diri tidak dilaporkan selama kegiatan pengumpulan informasi Komisi. Penelitian lebih lanjut mengenai pengalaman pasukan Falintil/Fretilin selama periode ini perlu dilakukan untuk memperkaya materi yang dimiliki Komisi.

Sarana perang di luar hukum

127. Hukum humaniter membatasi jenis senjata dan teknik (“sarana perang”) yang boleh digunakan untuk melukai pasukan lawan.¹³⁵ Dua prinsip umum berlaku:

1. Dilarang menggunakan sarana perang yang menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu¹³⁶
2. Dilarang menggunakan sarana perang yang tidak memungkinkan penyerang untuk membedakan antara sasaran militer dan sipil (“sarana yang tidak membedakan”).¹³⁷ Larangan ini mencakup taktik seperti meracuni air atau bahan makanan,¹³⁸ dan usaha untuk membuat penduduk kelaparan.¹³⁹

128. Invasi Indonesia ke Timor-Leste pada 1975 adalah operasi militer skala besar yang melibatkan ribuan pasukan yang menggunakan peralatan tempur berat maupun ringan. Dokumen militer resmi yang diperoleh Komisi berisi daftar senjata dan prosedur yang digunakan selama operasi di Timor-Leste.¹⁴⁰ Kebanyakan prosedur ini bertujuan utama untuk penghancuran skala besar, meski ABRI/TNI sering menggunakan bom-bom ini dalam operasi mereka untuk menghancurkan sasaran nonmiliter termasuk rumah penduduk sipil, panen tanaman pangan, sawah, dan bahkan penduduk sipil, yang mencerminkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.

129. Komisi juga mendapatkan informasi tentang jenis amunisi yang digunakan oleh militer Indonesia selama operasinya di Timor-Leste.¹⁴¹ Meskipun hukum perang mengizinkan penggunaan jenis-jenis amunisi yang ada dalam daftar untuk operasi militer dengan sasaran pasukan bersenjata lawan dan target militer atau target sipil tertentu yang digunakan untuk tujuan militer, amunisi ini tidak dapat digunakan untuk menyerang penduduk sipil selama operasi militer, atau dalam situasi di mana sulit untuk membedakan antara petempur dan penduduk sipil. Komisi juga menerima laporan yang menyatakan bahwa ABRI menanam ranjau di bangunan sipil atau sekitarnya. Penduduk desa Maneluma (Laulara, Aileu) menceritakan kepada Komisi bahwa pada 1978, banyak penduduk desa menyerahkan diri kepada ABRI. Saat itu, salah seorang penduduk, Aurelia Daumali, dilaporkan menginjak ranjau saat sedang mencari makanan di sekitar gereja, dan meninggal.¹⁴²

130. Komisi menerima pernyataan-pernyataan berkaitan dengan 285 pengeboman dari udara oleh militer Indonesia antara 1975 dan 1979, dan 125 di antaranya memerinci bagaimana pengeboman tersebut menewaskan penduduk sipil, menghancurkan rumah-rumah serta bangunan-bangunan lain dan tanaman pangan. Pengeboman terjadi di semua distrik, kecuali Oecussi. Sebagian besar laporan yang diterima berkaitan dengan pengeboman yang terjadi pada 1978, ketika *Zona Libertadas* (zona bebas) mengalami serangan hebat, yang mengakibatkan banyak penduduk sipil meninggal dan kehancuran zona-zona ini, dan ribuan penduduk sipil menyerahkan diri kepada pasukan ABRI/TNI (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan).

131. Sejumlah laporan Profil Komunitas di Komisi memberi konfirmasi bahwa pengeboman udara membunuh banyak penduduk sipil yang melarikan diri dari invasi. Komisi menerima sejumlah laporan yang memastikan penggunaan senjata kimia atau biologis oleh pasukan Indonesia terhadap penduduk sipil dan sasaran militer.* Masyarakat desa di berbagai tempat mengatakan kepada Komisi tentang banyaknya korban meninggal akibat keracunan setelah pengeboman udara Indonesia. Lokakarya Profil Korban dari Subdistrik Atsabe (Ermera) menyatakan bahwa pengeboman di wilayah-wilayah mereka selama 1976 dan 1977 menyebabkan kelumpuhan anggota badan dan akhirnya menyebabkan kematian, dan menyatakan bahwa sebanyak 2.500 orang mati akibat keracunan.¹⁴³ Peristiwa serupa terjadi di Lacló (Atsabe, Ermera) dan Paramin (Atsabe, Ermera) pada Januari 1977. Sekitar 1.500 penduduk desa yang pindah ke Cailaco di Lesumau (Atsabe, Ermera) untuk menghindari dari kelaparan akhirnya meninggal setelah makan sayuran, jagung, dan minum air. Korban yang selamat menceritakan kepada Komisi bahwa mereka yakin hal ini disebabkan karena racun yang dijatuhkan oleh pesawat pengebom Indonesia.¹⁴⁴ Dalam kejadian selanjutnya pada 1978 di Laubono di Desa Lesumau (Atsabe, Ermera), banyak penduduk desa dari Lasaun (Atsabe, Ermera), bersama prajurit Falintil yang berkumpul di Lesumau, mati karena keracunan makanan

* Beberapa pernyataan (lihat misalnya Pernyataan HRVD 04078) berisi perincian tentang bom yang menunjukkan bahwa ini melebihi aturan standar. [Lihat juga wawancara CAVR dengan Francisco Barbosa, Desa Manumera (Turiscai, Manufahi), 8 September 2003]

dan air dalam masa satu bulan setelah pengeboman ABRI.¹⁴⁵ Penduduk desa di Guololo (Letefoho, Ermera) juga mengatakan kepada Komisi bahwa sepanjang Juni 1978 banyak penduduk sipil di Cailaco (Bobonaro) meninggal karena keracunan makanan dan air.¹⁴⁶

132. Augusto Soares, yang saat itu berusia 17 tahun, menceritakan kepada Komisi tentang kematian penduduk sipil akibat keracunan di Lesumau (Atsabe, Ermera) antara 1977 dan 1978:

Pengeboman racun tersebut mengakibatkan semua bahan makanan terkontaminasi dengan racun. Apabila penduduk pergi memetik dedaunan liar, dimasak, kemudian dimakan, meninggal; minum air bersih juga meninggal, menggali ubi kayu sedalam 15 sentimeter untuk dimakan juga meninggal. Jadi, penduduk yang meninggal akibat bom racun tersebut kira-kira 400 orang, yang paling banyak adalah penduduk Desa Katrai Kraik [Letefoho, Ermera], yaitu satu RK semuanya meninggal, yang hidup hanya seorang nenek dan anak perempuannya. Sekarang mereka tinggal di Desa Katrai Kraik.¹⁴⁷

133. Augusto Soares mengatakan kepada Komisi bahwa ribuan orang yang melarikan diri dari ABRI/TNI bergerak dari Letefoho (Ermera), ke Ermera, Ainaro, Aileu, dan Cailaco (Bobonaro) berlandung di basis Fretilin/Falintil di Katrai Leten, di kaki Gunung Ramelau (Letefoho, Ermera). Pasukan Falintil mengumpulkan para pengungsi ini di luar jangkauan tembakan sehingga mereka bisa bercocok tanam untuk menghindari kelaparan. Pada 1978, militer Indonesia menyerang Katrai Leten dari Atsabe (Ermera), Same (Manufahi), dan Bobonaro. Mereka mengepung desa-desa penduduk dan menembakkan mortir, bazoka, dan meriam dari keempat arah, sementara pesawat-pesawat menjatuhkan bom yang mengakibatkan banyak korban meninggal, serta kehancuran basis Katrai Leten dan tertangkapnya banyak penduduk sipil.¹⁴⁸

134. Komisi juga menerima laporan-laporan tentang helikopter-helikopter yang menjatuhkan racun, yang menyebabkan lebih daripada 200 penduduk sipil meninggal di Desa Bora dan Manelima (Laclubar, Manatuto).¹⁴⁹ Komisi tidak bisa menentukan jenis-jenis bom yang digunakan untuk meracuni tanaman pangan dan air, karena keterbatasan akses ke dokumen militer Indonesia. Setelah Operasi Seroja selesai, militer Indonesia tetap menggunakan racun yang mengakibatkan hancurnya semua pohon dan tanaman. Penduduk Desa Kakae Uman (Natabora/Barique, Manatuto) melaporkan bahwa militer Indonesia meracuni tanaman pangan selama Operasi Kikis pada 1981. Masyarakat juga mengatakan kepada Komisi bahwa selama satu bulan pada 1983, militer Indonesia memaksa penduduk desa terlibat dalam sebuah operasi di hutan dan meracuni semua tanaman pangan, yang menurut beberapa orang hal tersebut dilakukan untuk meracuni dan membunuh prajurit Falintil yang mungkin memakan tanaman tersebut.¹⁵⁰

135. Pasukan Indonesia sangat mengandalkan bom-bom berkekuatan besar yang mempunyai akurasi terbatas, yang mengakibatkan banyak korban penduduk sipil, meskipun bom-bom ini ditujukan kepada sasaran militer. Komisi menerima pernyataan, misalnya, bahwa pada 1978 hingga 800 orang dari Desa Guruca (Quelicai, Baucau) yang melarikan diri ke Gunung Matebian meninggal dari pengeboman udara.¹⁵¹ Sejumlah laporan lain dari masyarakat jelas menggambarkan kerusakan yang disebabkan oleh kampanye pengeboman tanpa henti selama periode ini.¹⁵²

136. Menurut Lucas da Costa Xavier, mantan prajurit ABRI/TNI yang bertugas di Same (Manufahi) yang terlibat dalam sejumlah operasi militer, selama dua minggu pada 1978 militer Indonesia menembakkan roket ke semua arah setiap malam, termasuk ke daerah-daerah yang diduga menjadi tempat persembunyian Fretilin di Tutuluro, Kablaki, Roin, dan Hola Rua (Same, Manufahi). Lucas da Costa Xavier mengatakan kepada Komisi bahwa seorang penduduk sipil memberitahu dia tentang operasi terkait, bahwa :

Bom yang dijatuhkan itu apabila mengenai pohon-pohon dan rumput langsung terbakar dan apabila mengenai air maka air tersebut tidak boleh diminum karena sudah mengandung racun. Ada banyak masyarakat sipil yang mati akibat minum air yang terkena pecahan bom yang dijatuhkan dari pesawat dan banyak sekali masyarakat yang mati karena terbakar api... Saat itu juga musim kemarau sehingga rumput-rumput itu mudah sekali terbakar api.¹⁵³

137. Berdasarkan gambaran yang diberikan kepada Komisi tentang pengeboman-pengeboman tersebut, dan tujuan-tujuan strategis kampanye militer menghadapi gerilya, Komisi menyimpulkan bahwa bom api digunakan dalam kampanye-kampanye tersebut. Pesawat-pesawat OV-10 buatan Amerika telah digunakan,¹⁵⁴ dilengkapi dengan senjata ringan, roket, dan *Opalm*, bom sejenis *napalm* buatan Soviet yang dibeli Indonesia selama kampanyenya di Irian Barat pada 1962.¹⁵⁵ Komisi menerima salinan film propaganda militer Indonesia tentang kampanye pada akhir dekade 1970-an, termasuk dokumen panjang mengenai persiapan pengeboman di Bandara Baucau, serta dokumen mengenai pengeboman itu sendiri. Dalam dokumen tersebut, anggota militer Indonesia terlihat di film sedang memuat bom-bom bertuliskan 'OPALM' ke dalam pesawat-pesawat OV-10 *Bronco* di Bandara Baucau. Pesawat-pesawat tersebut kemudian terlihat lepas landas.¹⁵⁶ Lebih jauh, dokumen rahasia militer Indonesia yang diserahkan ke Komisi berisi perincian tentang senjata yang digunakan, termasuk bom OPALM, yaitu bom yang efeknya luas dan sasarannya tidak jelas, dan penggunaan pesawat OV-10 *Bronco* dan *Sky Hawk*. Tabel-tabel berikut diambil dari dokumen rahasia Indonesia.

Tabel 1: Kemampuan taktis pesawat.*

| Tipe Senjata | A-4 SKY HAWK | OV-10F BRONCO |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Senjata Otomatis | Dua meriam 30 MM (250 peluru) | 4 meriam 12,7 (1600 peluru) |
| Roket | 6 Peluncur (42 Rx FFAR-2,75) | 4 Peluncur (28Rx FFAR-2,75) |
| Bom | 8 bom | 5 bom |
| Amunisi | Peluru 30 MM | Peluru 12,7 MM |
| | Roket FFAR 2,75 inci | Roket FFAR 2,75 inci |
| | Bom MK-81-130 kg | Bom MK-81-130-kg |
| | Bom MK-82-250 kg | Bom MK-82-250 kg |
| | Bom FAB-250 kg | Bom FAB 25 k |
| | Bom OFAB-100 kg | Bom OFAB 100 kg |
| | Bom TAL-1-250 kg | Bom TAL 1-250 kg |
| | Bom ZHB-100 kg | Bom ZHB-100 kg |
| | Bom MK-1-130 kg | |

Tabel 2: Jenis amunisi dan jangkauannya

| Amunisi | Kemampuan | Minimum Jangkauan |
|----------------------|--|-------------------|
| Peluru 12,7 MM | Anti-personel, radius 10 m | 500 m |
| Peluru 30 MM | Anti-personel dan mampu menembus baja, radius 35 m | 500 m |
| Roket FFAR 2,75 inci | antitank dan Anti-personel, radius 130 m | 700 m |
| Bom KM-1-130 kg | Manfaat Umum, radius 400 m | |
| Bom MK-82-250 kg | Manfaat Umum, radius 540 m | 1.700 m |
| Bom MK-5B-250 kg | Sasaran pembakaran, dengan panas mencapai +/- 1725 derajat Celcius selama 15 menit, radius 600 m | 2.000 m |
| Bom TAL-1- 250 kg | Anti-personel, radius 260 m | 2.000 m |
| Bom FAB-250 kg | Anti-personel dan sasaran lunak (rumah), radius 495 m | 2.000 m |
| Bom OFAB-100 kg | Anti-personel dan sasaran keras (gudang), radius 370 m | 1.700 m |
| Bom ZHB-100 kg | Anti-personel dan membakar dalam radius 340 m | 1.700 m |
| OPALM | Membakar sasaran dengan panas mencapai +/- 1.725 derajat Celcius, radius 400 m | 1.500 m |

Prosedur Resmi Operasional, No.: PROTAP/3/IV/1988, kemampuan pesawat Taktis, 30 April 1988, Angkatan Bersenjata Indonesia, Komando Operasi Keamanan Timor Timur.

* *Prosedur Operasional Resmi, No. PROTAP 3/IV/1988, Kemampuan Taktis Pesawat, 30 April 1988, Angkatan Bersenjata Indonesia, Komando Operasi Keamanan Timor Timur.*

138. Tabel “Kemampuan taktis pesawat” menunjukkan pentingnya pesawat-pesawat buatan luar negeri dalam penyerangan, dan kemampuan luarbiasa dari pesawat-pesawat ini. Tabel “Jenis amunisi dan jangkauannya” membuktikan pasokan “OPALM” yang dipakai di Timor-Leste, dan bom seperti dicantumkan di atas yang digunakan untuk sasaran lunak (rumah), serta bom anti-personel dengan radius cukup besar dan “membakar sasaran” yang diragukan akan secara aman menjamin hanya berdampak pada target militer, jika dipakai di daerah pergunungan yang dekat penduduk sipil. Dokumen tersebut dari 1988, tetapi kesaksian di hadapan Komisi membuktikan adanya pemakaian OV-10 Bronco pada akhir dekade 1970-an yang melancarkan serangan pengeboman di wilayah-wilayah padat penduduk dengan efek yang sangat mengerikan bagi penduduk sipil (lihat Bagian 3: Sejarah konflik; dan Bab 7.3: Pemandahan paksa dan kelaparan).

139. Meskipun sebuah perjanjian yang melarang penggunaan senjata-senjata pembakar seperti napalm belum dibuat hingga 1980,¹⁵⁷ dan tidak pernah ditandatangani atau diratifikasi oleh Indonesia, sebagian besar penggunaan senjata perang semacam ini melanggar prinsip-prinsip umum yang melarang cara perang dan persenjataan yang mengakibatkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.

140. Adriano João, yang menjadi *Delegado* (wakil) Fretilin di Cailaco (Bobonaro) hingga 1979, menceritakan kepada Komisi bahwa pada 1977 bom-bom napalm dan roket-roket ditembakkan pesawat militer *Sky Hawk*, yang menimbulkan iritasi kulit yang parah dan kematian penduduk sipil.¹⁵⁸ Penduduk Desa Obulo dan Butamanu (Atsabe, Ermera) juga melaporkan bahwa militer Indonesia menjatuhkan bom-bom Napalm di Atasuro di Lesumau, yang menyebabkan kematian dua belas penduduk sipil pada 1979.¹⁵⁹

Perekrutan paksa ke dalam kegiatan militer

141. Hukum humaniter melarang pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memaksa warga negara musuh untuk mengambil bagian dalam operasi militer melawan negaranya sendiri.¹⁶⁰ Kekuatan pendudukan tidak boleh memaksa penduduk sipil untuk berdinasi di dalam pasukan militer atau pasukan binaannya,¹⁶¹ dan tidak boleh menggunakan tekanan atau propaganda untuk mendorong pendaftaran ke dalam dinas militernya.¹⁶²

142. Setelah invasi pada akhir 1975 dan operasi-operasi militer sesudahnya untuk menguasai wilayah Timor-Leste, militer Indonesia memulai proses untuk merekrut penduduk sipil Timor-Leste untuk membantu mereka dalam operasi-operasi militer. Mulai akhir 1974, militer Indonesia telah melatih anggota partai politik prointegrasi Apodeti, dan menyebut mereka kekuatan partisan. Anggota partai politik UDT yang lari ke Timor Barat, Indonesia, setelah kekalahan dalam konflik internal bersenjata, bergabung dengan Partisan dan membantu militer Indonesia dalam operasi-operasi lintas batas dan akhirnya dalam invasi skala penuh. Setelah invasi Dili dan Baucau, dan setelah menguasai wilayah distrik-distrik di bagian barat Timor-Leste, militer Indonesia mulai melakukan proses perekrutan penduduk sipil,

terutama laki-laki dewasa dan anak-anak, untuk digunakan mengangkut barang dan kebutuhan logistik militer lainnya. Kampanye perekrutan ini dikenal dengan istilah Tenaga Bantuan Operasi (TBO). TBO sering menyertai pasukan ke garis depan pertempuran, membawa amunisi dan barang-barang lainnya. Kadang mereka bertindak sebagai penunjuk jalan bagi militer Indonesia, dan bahkan disusupkan ke *zonas libertadas* sebagai mata-mata ABRI/TNI (lihat Bab 7.8: Hak anak, terutama kotak mengenai peran TBO dalam operasi militer).

143. Beberapa operasi militer tertentu melibatkan perekrutan paksa penduduk sipil. Operasi Kikis, seperti dibahas di atas, misalnya, mewajibkan partisipasi paksa penduduk sipil secara massal (lihat juga Bagian 3: Sejarah konflik); Pasukan Tombak, seperti dibahas pada paragraf 185 – 192 di bawah; pencarian paksa keluarga penduduk sipil di hutan dan gunung; tugas jaga malam di komunitas tertentu; serta partisipasi paksa dalam pertahanan sipil dan struktur milisi lokal.

144. Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi menunjukkan bahwa perekrutan penduduk sipil oleh militer Indonesia, baik yang dipaksa maupun yang tidak, terutama ditujukan pada laki-laki dewasa, meski juga melibatkan sejumlah besar anak-anak (lihat Bab 7.8: Hak anak). Pernyataan-pernyataan di atas juga menyatakan bahwa perekrutan ini dimulai sebelum invasi, dan meningkat setelah invasi, dan terus meningkat secara tetap selama periode Operasi Seroja antara 1975 sampai 1979. Antara akhir 1979 dan 1981, sebelum Operasi Kikis dimulai, perekrutan menyusut. Perekrutan ini meningkat secara pesat melalui kampanye perekrutan besar-besaran yang menyertai Operasi Kikis 1981. Setelah Operasi ini, jumlah penduduk sipil yang direkrut terus menurun, sebelum meningkat kembali pada akhir 1998 dan awal 1999.

145. Komisi mengambil pernyataan sekitar 405 kasus perekrutan paksa penduduk sipil ke dalam operasi militer Indonesia selama periode 1975-1979. Sebanyak 292 kasus lainnya juga diterima selama periode 1980-1990, dan ini menurun menjadi 143 kasus selama periode 1990-1999. Jumlah kasus perekrutan meningkat lagi pada akhir 1998 dan awal 1999 ketika militer Indonesia mulai melancarkan kampanye pembentukan kelompok milisi pro-otonomi di seluruh Timor-Leste. Jumlah kasus perekrutan TBO yang melaporkan yang relatif sedikit selama periode Operasi Seroja dan Operasi Kikis, ketika banyak penduduk sipil direkrut paksa untuk mendukung operasi militer di seluruh wilayah Timor-Leste, konsisten dengan opini publik yang pada umumnya tidak menganggap perekrutan paksa sebagai pelanggaran berat dibanding pelanggaran lainnya yang terjadi di mana-mana selama tahun-tahun penahanan dan penyiksaan, pembunuhan, serta penghilangan dan pelanggaran berat lainnya.

146. Komisi menyadari bahwa tidak semua orang Timor-Leste yang terlibat sebagai TBO atau dalam kapasitas lain untuk mendukung militer Indonesia dipaksa melakukan hal tersebut. Jelas ada orang yang menjadi TBO atau personel pendukung lainnya dalam tubuh ABRI/TNI karena berbagai alasan ekonomi, keamanan, pribadi, dan politik (lihat Bagian 4: Rezim pendudukan; Bab 7.8: Hak anak, subbab mengenai TBO anak).

Bagan jumlah tindakan perekrutan paksa yang dilaporkan, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Pola-pola Perekrutan

147. Dalam setiap periode konflik, pendaftaran dan perekrutan paksa penduduk sipil Timor-Leste digunakan untuk tujuan strategis militer dan politis tertentu. Selain manfaat-manfaat praktis seperti menggunakan ‘tenaga kerja’ lokal, praktik ini juga bermanfaat untuk memecah belah dan melemahkan komunitas Timor-Leste dan masyarakat pada umumnya, serta memberi dasar bagi propaganda Indonesia bahwa ada banyak dukungan bagi kehadiran mereka di Timor-Leste.

148. Walaupun perekrutan ditujukan bagi laki-laki dewasa, Komisi menerima bukti jelas bahwa perempuan dan anak-anak juga dipaksa berpartisipasi di sejumlah lokasi dalam berbagai operasi militer. Perekrutan paksa digunakan sebagai taktik untuk mengkonsolidasi invasi, dan bahkan digunakan dalam tahap pra-invasi ketika pasukan Indonesia secara rahasia menyusup ke bagian barat wilayah ini. Odete dos Santos mengatakan kepada Komisi tentang perekrutan paksa sebagai TBO sebelum invasi skala penuh terjadi.

Pada tahun 1975, L20 (mantan Bupati Bobonaro) dari partai UDT memaksa keluarga saya dan saya untuk pindah ke Atambua [Timor Barat]. Di sana [Atambua], TNI memaksa dua orang, Lesu Bere dan Alfredo Lopes, untuk menjadi TBO. Mereka kemudian ikut operasi di Atabae [Bobonaro] bersama TNI. Lesu Bere ditembak mati oleh TNI di Atsabe. Mayatnya dibawa dan dikubur di dekat perbatasan dengan Atambua. TNI juga membunuh dan mengubur Alfredo Lopes di Maliana [Bobonaro]. Kuburannya masih ada di sana sampai sekarang.¹⁶³

149. Selama periode Operasi Seroja pada tahun-tahun setelah invasi, Komisi menerima pernyataan tentang perekrutan paksa oleh militer Indonesia di setiap distrik di wilayah Timor-Leste kecuali Oecussi, karena saat itu di sana tidak ada operasi militer.

150. Kebanyakan perekrutan TBO terjadi pada tahun-tahun awal Operasi Seroja antara 1975-1979, masa-masa saat militer Indonesia melancarkan operasi militer besar-besaran di seluruh wilayah Timor-Leste dalam upaya mengalahkan resistansi bersenjata Fretilin/Falintil. TBO direkrut secara luas dari kelompok penduduk sipil yang menyerah selama periode ini.

151. Kesaksian yang diterima Komisi menunjukkan bahwa militer Indonesia sengaja mencari pendukung Fretilin atau anggota Falintil untuk dijadikan TBO. Maumali Sarmiento, anggota Fretilin berusia 31 tahun, ditangkap ABRI pada hari pertama invasi dilancarkan dan tetap menjadi TBO selama tiga tahun. Dia mengatakan kepada Komisi:

Pada tanggal 7 Desember 1975, ketika invasi militer Indonesia ke Dili dilancarkan saya menjadi anggota Fretilin bersama dua teman, Mau Mali dan Domingos da Silva. Kami dipaksa direkrut menjadi TBO oleh anggota pasukan Marinir 1, Zipur 10, dan Armed 1. Kami berangkat bersama pasukan dalam operasi sampai Metinaro. Selama tiga tahun kami menjadi TBO, tugas kami termasuk mengumpulkan kayu bakar, memasak, mengambil air, dan mencuci pakaian.¹⁶⁴

152. Kesaksian serupa diterima dari José Nunes de Andrade, seorang simpatisan Fretilin yang melarikan diri ke Same pada 1975, dan ditangkap ABRI saat mereka menguasai wilayah tersebut. Ia digunakan sebagai pengangkut barang dengan berjalan kaki melintasi pergunungan, dan tetap menjadi TBO sampai 1979.¹⁶⁵ Flaviano dos Santos adalah anggota Falintil bersenjata saat ditangkap di Atabae (Bobonaro) pada 1975. Dia mengatakan kepada Komisi bahwa setelah ditangkap dia dipaksa membawa makanan dan amunisi untuk dua batalion militer selama sembilan bulan. Pada 1976, ketika ia diizinkan kembali ke daerah asalnya, milisi Timor setempat serta anggota ABRI telah merampas rumahnya dan harta miliknya yang lain.¹⁶⁶

153. Pada Januari 1976, ketika ABRI merebut Atabae (Bobonaro), banyak penduduk sipil menyerah atau ditangkap oleh mereka. Agostinho dos Santos Barreto mengatakan kepada Komisi bahwa sekitar 400 penduduk sipil dipaksa menjadi TBO dalam operasi-operasi militer di sekitar Bobonaro dan di Maubara (Liquiçá), sebelum kembali ke Atabae di mana sebagian diizinkan kembali ke keluarganya masing-masing sementara yang lainnya dipaksa tetap menjadi TBO.¹⁶⁷

154. Cerita serupa dilaporkan kepada Komisi oleh penduduk desa Guruça (Quelicaí, Baucau). Pada Mei 1978, 500 penduduk menyerahkan diri kepada militer Indonesia setelah turun dari Gunung Matebian. Walaupun banyak di antara para laki-laki yang sakit dan lemah, mereka dipaksa untuk bekerja bagi ABRI dan Hansip, di mana

sekitar 60 orang direkrut sebagai TBO untuk operasi militer Indonesia, sementara para perempuan dipaksa ikut jaga malam.¹⁶⁸

155. Beberapa laporan yang diterima Komisi mengungkap bagaimana anggota Fretilin/Falintil yang menyerah atau ditangkap selama masa ini kadang dipaksa untuk kembali ke hutan untuk mencari Falintil. Pada 1978, misalnya, Horacio Sousa, yang berjuang dengan pasukan Falintil yang beroperasi di Nunululi (Laclubar, Manatuto), ditangkap bersama empat orang lainnya. Setelah mendekam satu minggu dalam penahanan di Fatumakerek-Laclubar, mereka diberi seragam Hansip dan senjata dan dipaksa berpartisipasi dalam serangkaian operasi militer bersama Linud 100 di sekitar Laclubar (Manatuto), Alas (Manufahi), dan Maubisse (Ainaro).¹⁶⁹

156. Komisi menerima kesaksian dan mendengar dari masyarakat di wilayah timur bahwa TBO orang Timor-Leste terlibat dalam serangan akhir ABRI/TNI di Gunung Matebian.¹⁷⁰

157. Kampanye perekrutan massal yang mengerahkan penduduk sipil untuk digunakan dalam Operasi Kikis tidak pernah terjadi sebelumnya, karena melibatkan struktur pemerintahan sipil setempat yang didirikan untuk melengkapi administrasi militer yang secara efektif menguasai wilayah. Partisipasi bersifat wajib, dan Komisi menerima sejumlah laporan tentang penyiksaan terhadap penduduk sipil yang menolak terlibat.¹⁷¹

158. Operasi-operasi serupa juga dilancarkan oleh militer Indonesia sepanjang 1982 dan 1983, dalam upaya mencari sisa-sisa pejuang Fretilin/Falintil. Meskipun demikian selama periode ini perekrutan penduduk sipil relatif terbatas dan kampanye militer hanya terbatas pada operasi-operasi pencarian di daerah-daerah tertentu. Selama operasi tersebut penduduk desa diperintahkan untuk menghancurkan, meracuni, dan membakar tanaman pangan yang mereka temukan untuk mencegah agar Fretilin/Falintil tidak bisa memanfaatkannya.¹⁷²

Kerja sebagai TBO—risiko dan bahayanya

159. Kondisi kerja bagi TBO sungguh berat, dan mereka sering berada dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Bahaya dan ancaman datang dari berbagai sumber. Gizi yang buruk dan penyakit melemahkan dan membunuh banyak orang; TBO sering menjadi korban dalam pertempuran, ditangkap, atau dibunuh oleh pasukan Fretilin/Falintil; beberapa TBO dibunuh oleh militer Indonesia; sementara TBO lainnya tidak pernah kembali dari operasi-operasi dan hilang hingga kini.

160. Floréntino Santos dari Desa Talimoro (Ermera, Ermera) mengatakan kepada Komisi bahwa kakak laki-laknya yang dipaksa menjadi TBO di Liquiçá ditangkap dan dibunuh oleh Falintil pada 1976.¹⁷³ Moises da Costa, yang berusia 11 tahun ketika bapaknya menyerahkan diri kepada militer Indonesia pada 1978, mengatakan kepada Komisi bahwa bapaknya dipaksa kembali ke hutan untuk mencari keluarganya, tetapi ditangkap dan dibunuh oleh Falintil yang menuduhnya sebagai mata-mata ABRI.¹⁷⁴ Komisi menerima sejumlah laporan tentang orang-

orang yang hilang, yang terakhir kali diketahui direkrut sebagai TBO, tapi tidak pernah kembali dari operasi.¹⁷⁵

161. Lokakarya Profil Komunitas Komisi juga memberikan penjelasan mengenai dampak perekrutan TBO. Penduduk desa Defawassi (Baguia, Baucau) misalnya, menjelaskan bagaimana mereka menyerahkan diri kepada pasukan ABRI pada Oktober 1978 setelah serangan di Gunung Matebian. Militer Indonesia memaksa mereka tinggal di kamp-kamp, di mana banyak yang meninggal akibat penyakit dan kelaparan, dan mereka yang masih memiliki keluarga di hutan disiksa. Para laki-laki dipaksa bekerja sebagai TBO. Sekitar 40 pemuda Defawassi menjadi TBO, dan sebagian besar meninggal dalam pertempuran.¹⁷⁶

162. TBO anak terutama paling rentan dan banyak yang diduga meninggal akibat kelelahan dan kesehatan yang buruk karena kekurangan makanan dan obat-obatan, karena harus membawa beban berat dalam operasi militer. Menurut Domingas Freitas, misalnya, adik laki-lakinya, Rai Ano, dan temannya, Zeca, direkrut sebagai TBO di Viqueque pada 1978. Domingas Freitas diberi tahu oleh Zeca bahwa Rai Ano meninggal di kota Uatulari (Viqueque) karena kondisi fisik mereka yang lemah dan mereka dipaksa membawa peralatan tempur yang berat.¹⁷⁷

163. Banyak TBO dijadikan sasaran perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan. Anacleto Pires dari Katrai Kraik (Letefoho, Ermera) misalnya, menjelaskan kepada Komisi bahwa pada 1976 dia dibawa secara paksa ke ABRI oleh kepala kampung setempat, yang memaksa dia untuk bekerja sebagai TBO selama dua tahun:

*Tugas saya membuat kopi, membawa ransel untuk Batalion 521 TNI dalam operasi mereka di hutan. Saya dijadikan sasaran penganiayaan seperti dipukul dan direndam dalam kolam air setiap malam.*¹⁷⁸

164. Dengan berakhirnya Operasi Seroja pada 1979, setelah militer Indonesia berhasil menghancurkan semua basis utama Fretilin/Falintil di pedalaman, ABRI memusatkan operasi militernya di wilayah-wilayah yang belum dikuasai. Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi dari distrik Manufahi, Viqueque, Manatuto, dan Baucau, menunjukkan berlanjutnya perekrutan paksa selama periode ini.

165. Beberapa lokakarya Profil Komunitas Komisi dari Distrik Viqueque melaporkan bahwa perekrutan paksa penduduk sipil menjadi TBO pada 1979 terjadi setelah penangkapan besar-besaran penduduk sipil yang selama ini berada di gunung.¹⁷⁹ Komisi juga menerima sejumlah pernyataan di Viqueque dari orang-orang yang dipaksa bekerja untuk militer Indonesia dan pasukan Hansip selama periode ini.¹⁸⁰ Domingos Miguel mengatakan kepada Komisi:

Pada tahun 1979, kami dikumpulkan di kota Ossu [Viqueque] oleh Hansip yang tidak kami kenal. Suatu hari saya dipanggil untuk ikut operasi. Selama operasi, Hansip menangkap seorang anggota Falintil, Mateus. Dia langsung dijadikan TBO dan Hansip melanjutkan

perjalanan mereka ke Uato Carbau. Saat kami sampai di Uato Carbau, anggota Hansip membunuh seorang anggota Falintil yang tidak dikenal. Setelah kami kembali dari operasi, saya dipanggil Danramil. Saya dibawa ke Koramil Ossu dan ditahan di sana satu hari bersama 40 korban lain.¹⁸¹

166. Sebagian orang yang menyelesaikan "tugas" mereka sebagai TBO kemudian dipenjarakan. Mateus Damazo, misalnya, menceritakan kepada Komisi bahwa pada 1979, setelah ABRI menangkapnya di Alas (Manufahi), dia dipaksa membawa makanan dan amunisi serta memasak untuk pasukan dalam serangkaian operasi. Setelah menyelesaikan operasi-operasi ini dia tidak dibebaskan, tetapi justru ditahan selama setahun di Penjara Betano (Same, Manufahi).¹⁸² João Baptista S. Martins, yang berusia 11 tahun ketika dipaksa menjadi TBO pada Oktober 1979, melarikan diri setelah anggota ABRI memberi tahu bahwa ia akan dibawa ke Indonesia setelah ia menyelesaikan tugasnya sebagai TBO.¹⁸³

167. Penduduk sipil terutama sangat rentan terhadap penganiayaan fisik dalam konteks permusuhan yang terus berlanjut, dan selalu dilihat dengan penuh kecurigaan oleh militer Indonesia berkaitan dengan loyalitas mereka. Komisi menerima laporan bahwa penduduk sipil yang menyerahkan diri kepada ABRI disiksa sebelum dipaksa menjadi TBO.¹⁸⁴ Komisi juga menerima sejumlah pernyataan tentang penduduk yang disiksa setelah menjadi TBO, karena dicurigai tetap berhubungan dengan Fretilin/Falintil. António de Jesus mengatakan kepada Komisi tentang kakaknya yang hilang, seorang TBO muda pada 1982 yang dicurigai militer Indonesia berhubungan dengan Falintil:

Pada tahun 1982, Batalion 320 merekrut Domingos de Jesus menjadi TBO. Dia bersama pasukan pergi ke Lospalos, di Desa Soru. Dia kemudian dicurigai [oleh militer], jadi mereka membawa dia kembali menumpang pesawat helikopter militer Indonesia langsung ke Paitamor, Set, mereka langsung menginterogasi dan menyiksa dia agar mengaku tentang hubungannya dengan Falintil atau Fretilin. Setelah mendengar pernyataannya, [mereka] menyimpulkan bahwa dia seorang klandestin dan cukup berbahaya. Jadi, dia dibawa ke lokasi di Iliomar bernama Hama-Um untuk dibunuh. Kami masih belum menemukan mayatnya sampai sekarang.¹⁸⁵

168. Pada akhir Operasi Seroja, sudah merupakan praktik umum bagi tentara ABRI/TNI untuk mendapatkan bantuan penduduk sipil untuk tugas rumahtangga seperti memasak dan kebutuhan pribadi lain. Para TBO biasanya tinggal bersama anggota ABRI/TNI di kamp atau barak, dan kadang menyertai anggota ABRI/TNI dalam operasi lapangan. Hidup mereka sarat dengan berbagai penganiayaan. Komisi diberi tahu tentang lemahnya posisi perempuan dalam situasi demikian:

Pada tahun 1980 saya direkrut menjadi TBO. Selama dua bulan, saya melihat saudara perempuan saya sendiri, CM, diperkosa dan

dijadikan budak seksual oleh anggota ABRI. Saat pasukan bergerak dari Fahinehan, Ermelinda akhirnya dilepas. Tetapi saya dibawa mereka ke Same, Kablaki, Ainaro, Mamlau, Ermera, dan Dili. Selama menjadi TBO, saat kami beroperasi di hutan, saya punya kesempatan untuk membantu seorang anggota Falintil dengan memberi makan. Linus, teman saya dari Aileu, memberi tahu TNI Yonif 643 tentang hal ini. Jadi, saya ditendang dengan sepatu tentara dan mereka mengancam akan menembak saya. Mereka kemudian menambah beban yang harus saya bawa ke Ermera, Railako, dan Dili.¹⁸⁶

169. Meski beberapa orang bergabung sebagai TBO karena hal ini menjamin adanya bantuan sosio-ekonomi, kebanyakan tidak punya pilihan dan dipaksa terlibat. Beberapa orang setuju menjadi TBO karena takut,¹⁸⁷ yang lain karena tertangkap,¹⁸⁸ dan beberapa lainnya karena ABRI mengancam akan melukai keluarga mereka kalau mereka tidak mau.¹⁸⁹

TBO dalam Operasi Kikis, 1981

170. Di paruh kedua 1981, militer Indonesia melancarkan operasi besar-besaran menyusur seluruh wilayah untuk menangkapi pejuang Resistansi yang masih tersisa. Operasi Kikis memobilisasi banyak penduduk sipil dan memaksa mereka terlibat dalam operasi ini (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Pasukan teritorial ABRI/TNI dan pejabat sipil dari kampung, desa, dan distrik ditugaskan untuk merekrut penduduk sipil laki-laki berusia antara 12 sampai 35 tahun. Pada kenyataannya, ABRI/TNI juga merekrut penduduk yang lebih muda dan lebih tua serta melanggar kebijakan yang berlaku, bahkan mereka juga merekrut perempuan.¹⁹⁰ Menurut beberapa Laporan Profil Komunitas Komisi, laki-laki yang dipaksa ikut dalam operasi termasuk pegawai negeri sipil, guru, pelajar, perawat, pedagang, petani, dan pengangguran. Perekrutan ini mengakibatkan penutupan sementara sekolah-sekolah, rumah sakit, dan pusat kesehatan masyarakat selama masa operasi.¹⁹¹

171. Jumlah penduduk sipil yang direkrut paksa untuk Operasi Kikis masih diperdebatkan. Menurut sebuah dokumen militer Indonesia yang diterbitkan pada 1982, Operasi Kikis melibatkan 60.000 penduduk sipil, termasuk anggota struktur pertahanan sipil yang dibina ABRI seperti Wanra (Perlawanan Rakyat) dan Ratih (Rakyat Terlatih).¹⁹² Menurut penulis Ken Conboy, operasi ini melibatkan 33.000 penduduk sipil, yang bergerak dari dua arah: Pantai Laga dan Dili, dengan 12 batalion ABRI di belakang mereka, bergerak menuju lokasi pembunuhan dekat Aitana (Manatuto).¹⁹³ Sumber militer Indonesia lainnya menyatakan bahwa lebih banyak penduduk sipil yang dilibatkan dan mengakui bahwa delapan batalion disertai oleh 120.000 anggota milisi terlatih bergerak dari timur ke barat, ditambah dengan tujuh batalion yang disertai oleh 25.000 milisi terlatih yang bergerak dari barat ke timur.¹⁹⁴

172. Komisi menerima pernyataan dari 80 orang di tujuh distrik mengenai perekrutan penduduk sipil sebagai TBO selama Operasi Kikis. Selain itu, perincian mengenai perekrutan juga terdapat dalam sejumlah lokakarya Profil Komunitas Komisi dari beberapa bagian wilayah ini. Penduduk Desa Lelalai (Quelicai, Baucau), misalnya, menjelaskan bahwa pada 1981 pejabat pemerintah Distrik Baucau mengeluarkan instruksi yang memerintahkan semua laki-laki yang mampu secara fisik untuk ambil bagian dalam Operasi Kikis selama tiga bulan.¹⁹⁵ Laporan-laporan serupa juga diterima dari penduduk Desa Muapitine (Lospalos, Lautém),¹⁹⁶ dan dari Rasa (Lospalos, Lautém), di mana ratusan orang direkrut sebagai TBO selama periode ini. Masyarakat di Rasa mengatakan kepada Komisi bahwa perekrutan ini termasuk tiga orang remaja yang meninggal dalam operasi ini.¹⁹⁷

173. Perjalanan paksa selama operasi sangat berat, dan banyak penduduk sipil yang dipaksa ikut operasi oleh militer Indonesia meninggal karena alasan-alasan yang tak pernah sungguh-sungguh dijelaskan. Francisco António Menezes mengatakan kepada Komisi tentang kematian kakak laki-lakinya:

Pada tanggal 20 Agustus 1981 Vicente sakit malaria dan dia ingin mencari obat di kota Baguia. Ketika tiba di sana, banyak pasukan TNI dari Batalion 521 dengan anggota Hansip. Kemudian seorang anggota TNI L21 dan Hansip dan anggotanya menangkap Vincente Mariano Pinto, dan penduduk sipil lainnya, serta anak-anak muda. TNI Batalion 521 menyuruh anak-anak muda menjadi TBO, membawa ransel dan senjata ke hutan... Pada tanggal 12 Oktober 1981 saya dengar dari seorang anggota Batalion 521, L21, bahwa Vincente dan teman lain meninggal di Uatulari (Viqueque). L21 menyuruh saya mengunjungi kuburan Vincente di Teulale. Sampai sekarang, saya masih tidak tahu apa penyebab kematian Vincente dan di mana dia dikubur.¹⁹⁸

174. Pada 1982, TBO pada dasarnya sudah tidak lagi terlibat dalam operasi-operasi militer, tetapi disekap sebagai tahanan dan pembantu pribadi di barak ABRI/TNI. Mereka yang dicurigai mempunyai hubungan dengan Fretilin/Falintil tetap menjadi sasaran utama.¹⁹⁹ Mulai sekitar waktu itu, perekrutan paksa tidak terlalu serampangan dan mereka yang diinginkan para anggota ABRI untuk 'direkrut' sebagai TBO diharuskan menghubungi dan mengatur hal ini dengan Babinsa setempat.²⁰⁰

Dipaksa mencari keluarga di hutan

175. Komisi menerima 38 pernyataan berkaitan dengan penduduk sipil yang menyerah yang dipaksa militer Indonesia untuk kembali ke hutan untuk mencari anggota keluarga yang lain. Orlando da Silva dari Rotuto (Same, Manufahi) menceritakan kepada Komisi:

Pada awal tahun 1976, ABRI Batalion 509 menangkap Aniceto Mendes dan saya saat kami mencari makan. Mereka membawa kami ke Rotuto dan menginterogasi kami sambil menodongkan senjata,

tentang keluarga kami yang masih di hutan. Setelah ditahan satu hari, kami diberi ransum beras dan garam dan dipaksa mencari keluarga kami di hutan [dan menyuruh mereka] untuk menyerah. Kami tidak bisa menemukan keluarga kami. Yonif 509 juga memaksa Rosalina, Angelina, Hermenegilda, dan Filomeno pergi mencari keluarga mereka yang masih di hutan, tetapi mereka juga tidak berhasil, jadi Yonif 509 menahan Rosalina dan Hermenegilda di pos Yonif 509.²⁰¹

176. Sebagian besar kasus ini terjadi selama masa Operasi Seroja sampai 1979.

177. Penduduk sipil yang dipaksa kembali ke hutan untuk mencari keluarga mereka tidak diberi senjata. Sebagian akhirnya kembali bersama keluarga mereka. Alfredo da Silva Carvalho menceritakan kepada Komisi bahwa setelah menyerahkan diri kepada militer Indonesia pada 29 November 1978, saudara laki-laknya, João do Rosario de Fatima, dan tiga temannya dipaksa kembali ke hutan keesokan harinya untuk mencari anggota keluarga mereka. Mereka berhasil dan kemudian kembali ke Dili dengan anggota keluarga mereka.²⁰²

178. Penduduk Desa Waetami (Quelicai, Baucau) menceritakan kepada Komisi bahwa sekitar 1.000 orang dari desanya menyerah kepada militer Indonesia pada Juni 1979, setelah Marinir menguasai daerah itu. Penduduk laki-laki diperintahkan kembali ke hutan untuk menangkap gerilyawan Falintil, tetapi tidak berhasil dan kembali ke Quelicai dengan tangan hampa.²⁰³ Kisah serupa juga dilaporkan di daerah-daerah lainnya.²⁰⁴

179. Mantan anggota Falintil yang tertangkap juga dipaksa kembali ke hutan dan mencari anggota Falintil lainnya setelah diinterogasi dan disiksa. Mateus da Costa menceritakan kepada Komisi:

Pada tahun 1979, saya dipercaya menjadi komandan Fretilin. Tetapi pasukan TNI dari Batalion 700 menangkap saya di Betun Oan-Alas, [Manufahi] dan membawa saya ke Fatuberliu. Teman saya Mateus Torrejão dan saya disuruh TNI pergi ke hutan dan mencari saudara kami yang masih di sana. Kami pergi dan mencari tetapi tidak berhasil. Dalam perjalanan pulang, kami bertemu satu kompi pasukan Linud 100 dan kami dibawa ke Dili dengan berjalan kaki.²⁰⁵

180. Césarío de Jesus mengatakan kepada Komisi bahwa tentara Indonesia memaksa dia dan teman-temannya kembali ke hutan dan mencari anggota keluarga mereka atau anggota Fretilin/Falintil pada Maret 1979. Dia mengatakan bahwa militer Indonesia membawa tahanan Falintil dengan pesawat, dan para tahanan itu tidak pernah terlihat lagi.²⁰⁶

181. Tidak semua penduduk sipil yang dipaksa mencari keluarga mereka atau Falintil di hutan kembali dengan selamat. Magdalena Pereira dari Letefoho (Ermera) berusia 14 tahun pada 1977 ketika dia dan neneknya Laubrani ditangkap ABRI dan dibawa ke Koramil Letefoho. Setelah diinterogasi, mereka dipaksa mencari keluarga mereka

di hutan. Magdalena tidak melanjutkan perjalanan di luar Lauana, tetapi Laubrani dipaksa tentara ABRI dan Hansip melanjutkan dan ketika dia mulai berjalan dia ditembak di punggung dan langsung meninggal.²⁰⁷ Dalam beberapa kasus, mereka yang dikirim ke hutan tidak pernah kembali.²⁰⁸

182. Selama awal dekade 1980-an, militer Indonesia tetap memaksa penduduk sipil mencari anggota keluarganya yang masih belum menyerah.²⁰⁹ Tentara ABRI/TNI juga memukuli dan menyiksa penduduk sipil yang tidak berhasil menemukan anggota keluarga atau Falintil di hutan. Arlindo Fernandes Xavier mengatakan kepada Komisi:

Pada tahun 1983, TNI Batalion 623 datang dan memanggil Adolfo Fernandes Xavier dan memaksa dia pergi ke hutan mencari anggota Falintil, Manuel dos Santos. Karena dia tidak bisa menemukannya, mereka memukul Adolfo dengan senjata sampai dia babak belur. Adolfo kemudian ditahan satu hari satu malam di Pos [Batalion] 623 Lautém. Anibal Fernandes Xavier dan Etelevina Fernandes Xavier juga ditangkap dan dibawa ke Kodim Lospalos oleh anggota Kodim Lospalos. Mereka diinterogasi, disetrum, ditendang, dan dipukul dengan gagang senapan sampai mereka babak belur. Korban kemudian dimasukkan ke sel selama satu bulan. Setelah itu, korban Etelevina disuruh pulang, tetapi Anibal dibawa pergi oleh pelaku dan masih hilang sampai sekarang.²¹⁰

183. Pada 1983, perundingan gencatan senjata diadakan antara Falintil dan ABRI. Ketika itu juga terjadi sejumlah pembelotan oleh anggota pasukan binaan ABRI/TNI seperti Hansip di distrik Lautém, Viqueque, dan Ainaro. Di Lautém, setelah menerima perintah dari Xanana Gusmão untuk membawa senjata ke hutan, sejumlah anggota Hansip dan Ratih merampas senjata dari polisi dan Koramil dan melarikan diri ke hutan. Sebagai tanggapannya, pasukan keamanan memerintahkan perempuan yang suaminya lari ke hutan untuk mencari suami mereka di hutan.^{*} Militer Indonesia bereaksi dengan cara yang sama setelah Falintil membakar rumah penduduk di desa Mehara (Tutuala, Lautém), dan lagi 1987 di Poros/Herana di Desa Mehara, di mana ABRI memaksa para perempuan mencari suami mereka yang masih di hutan, dengan kawalan Hansip.²¹¹

184. Di Kraras (Viqueque, Viqueque), setelah *levantamento* (pemberontakan) pada 9 Agustus 1983, penduduk sipil diserang dan dibunuh oleh militer Indonesia dalam serangkaian pembantaian, sebagai balasan terhadap pembunuhan tentara Indonesia oleh dan dengan pembelotan anggota Hansip dan Ratih ke Falintil (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Pada awal 1984, sejumlah

* *Levantamento Armado* (Pemberontakan Bersenjata) di Ponta Leste terjadi pada 9 Agustus 1983, dipimpin oleh *liurai* Miguel dos Santos, dikenal sebagai Cuba Levantamento. Pemberontakan ini melibatkan anggota Hansip dan pemuda klandestin yang disebut Lorico Paicau. Pemberontakan terjadi atas perintah Komandan Falintil, Xanana Gusmão. [Profil Komunitas CAVR, Desa Mehara, Subdistrik Tutuala, Distrik Lautém 27 November 2002.]

penduduk sipil dan anggota Ratih masih berada di hutan. Penduduk mengatakan kepada Komisi bahwa pada awal 1984 anggota pasukan khusus, Kopassus, menculik 13 orang dari Kraras, membawa mereka ke hutan dan memaksa mereka mencari penduduk lainnya dan anggota Falintil. Dari 13 penduduk Kraras yang dipaksa melakukan hal ini, hanya enam yang kembali, sementara tujuh lainnya masih hilang.²¹²

Pasukan Tombak

185. Pada dekade 1980-an, suatu bentuk lain perekrutan paksa penduduk sipil ke dalam operasi militer Indonesia adalah dalam Pasukan Tombak. Nama ini diambil dari satu-satunya senjata yang boleh mereka bawa, yang membatasi kapasitas militer mereka dalam kaitannya dengan komandan militer Indonesia.

186. Tidak banyak yang diketahui tentang awal-mula dan perkembangan pasukan ini, walaupun data yang ada menunjukkan bahwa Pasukan Tombak hanya dibentuk di distrik-distrik yang dianggap rawan terhadap serangan Falintil/Fretilin setelah Operasi Kikis 1981. Setelah perundingan gencatan senjata gagal, dengan pemberontakan di Viqueque pada 1983 dan kembalinya penduduk sipil yang selama itu ditahan di Ataúro sejak 1980 karena dicurigai mempunyai hubungan dengan Fretilin/Falintil, kecurigaan Indonesia meninggi mengenai dukungan klandestin terhadap Resistansi. Indonesia membentuk Pasukan Tombak untuk mengawasi kegiatan penduduk sipil. Penduduk sipil direkrut secara paksa menjadi anggota Pasukan Tombak di sejumlah tempat di wilayah ini, tetapi mereka direkrut di daerah-daerah tempat Fretilin/Falintil masih aktif.²¹³ Perekrutan terus berlanjut sampai pertengahan dekade 1980-an, sering terpusat di komunitas-komunitas di mana penduduk laki-lakinya telah lari ke gunung-gunung setelah pemberontakan 1982 dan 1983.²¹⁴

187. Komisi menerima pernyataan dari 19 penduduk sipil yang dipaksa ikut Pasukan Tombak. Mereka kebanyakan dari Distrik Lautém dan Viqueque, dan menceritakan tentang perekrutan paksa ke dalam pasukan ini antara 1982 dan 1987.

188. Penduduk sipil yang direkrut ke dalam Pasukan Tombak sering adalah anggota Falintil yang telah menyerah, meski melibatkan juga penduduk sipil yang anggota keluarganya masih berada di hutan. Sejumlah pernyataan menunjukkan bahwa proses perekrutan dilakukan setelah penangkapan, penahanan, dan penyiksaan penduduk sipil dan orang lainnya yang ditangkap di wilayah yang dikuasai Fretilin/Falintil.²¹⁵

189. Dengan latar belakang perekrutan seperti ini, tidak mengherankan bila ABRI terus menyimpan kecurigaan terhadap penduduk sipil tertentu yang direkrut ke dalam Pasukan Tombak. Komisi menerima sejumlah pernyataan dari para mantan anggota Pasukan Tombak yang ditahan dan disiksa karena gagal menjalankan tugas mereka atau karena dicurigai memberi informasi atau bekerjasama dengan pasukan Falintil/Fretilin. Paulino Freitas mengatakan kepada Komisi:

Pada bulan September 1983, saya dan anak muda yang kuat direkrut sebagai Pasukan Tombak. Saya kenal beberapa orang; Ernesto, Afonso, Brandão, Faikaiik, dan Joaquim Kainoko. Kami direkrut oleh L23, Babinsa di Desa Uma Oan Kraik, dan oleh L24 dan L25, Komandan Babinsa. Setelah direkrut kami dilatih di Audian Matan, Kota Viqueque. Mereka juga menyuruh kami jaga malam... Suatu hari Adelino dan saya sedang tugas jaga malam ketika L23 dan L27 memukul kami dengan gagang senjata dan menendang kami, menuduh kami mempunyai rencana dengan Fretilin untuk menyerang pos yang kami jaga.²¹⁶

190. Setelah pemberontakan Kraras pada 1983, banyak orang lari ke hutan karena takut pembalasan dari militer Indonesia terhadap penduduk sipil. Militer Indonesia melancarkan operasi untuk memaksa mereka pulang ke desa mereka. Dalam operasi tersebut, serangkaian pembantaian penduduk sipil oleh militer Indonesia berlangsung (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Sebagian dari penduduk sipil yang kembali dipaksa bergabung dengan Pasukan Tombak sebagai penjaga untuk militer Indonesia.²¹⁷

191. Mereka yang direkrut ke dalam Pasukan Tombak juga berisiko dibunuh oleh Falintil ketika mereka dikirim ke hutan untuk mencari pasukan Fretilin/Falintil yang menganggap mereka sebagai kakitangan ABRI/TNI.²¹⁸ Jacinta Hornay mengatakan kepada Komisi tentang Pasukan Tombak yang ditempatkan di garis depan dengan Falintil dan akibatnya mereka terbunuh:

Pada bulan Mei 1984, Jacinto Pinto dan Tomás Ramos ditangkap oleh dua anggota TNI, dan dibawa ke Koramil Luro. Keduanya dicurigai mempunyai hubungan dengan [seorang anggota] Falintil bernama Mateus Morreira. Di Koramil, kedua korban dimasukkan ke sel selama tiga bulan.

Setelah tiga bulan, mereka dibebaskan, tetapi masih diwajibkan lapor setiap hari ke Koramil. Pada tanggal 8 Agustus 1984, atas perintah Koramil Luro, kedua korban dan 24 penduduk sipil lainnya dari Luro pergi sebagai Pasukan Tombak ke hutan mencari Falintil bernama Mateus Morreira. Di hutan, Jacinto dibunuh Falintil di Lakira[Lospalos]. Mayatnya ditemukan oleh pasukan Koramil dan dikubur pada tanggal 5 September 1984 di Luro.²¹⁹

192. Pasukan Tombak juga digunakan ABRI/TNI untuk melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil yang dicurigai berhubungan dengan Fretilin/Falintil.²²⁰

Jaga malam dan patroli paksa

193. Militer Indonesia juga memaksa penduduk sipil bertugas jaga malam dan melakukan patroli di masyarakat sepanjang periode pendudukan. Komisi menerima 74 pernyataan yang secara khusus menceritakan pengalaman-pengalaman ini.

Khususnya di masyarakat pedesaan di mana militer Indonesia khawatir akan serangan Falintil, penduduk sipil yang bertugas jaga malam dan patroli pada dasarnya dijadikan perisai untuk melindungi anggota pasukan bersenjata Indonesia.

194. Seperti dalam kasus-kasus perekrutan paksa lainnya, sering orang-orang yang baru menyerah atau ditangkap oleh pasukan Indonesia dipaksa menjalankan tugas ini. Dalam sejumlah kasus, penduduk sipil disiksa sebelum diwajibkan oleh militer untuk melakukan jaga malam.²²¹ Jaga malam dan patroli paksa terutama sering terjadi di komunitas yang baru saja dikuasai oleh militer Indonesia, saat ABRI/TNI masih belum yakin dengan kekuasaannya. Tingkat kepercayaan antara ABRI/TNI dan struktur keamanan binaan mereka beragam. Namun demikian dari pernyataan yang diterima, tampaknya, seperti juga dengan pengerahan penduduk sipil lainnya untuk peran militer, militer Indonesia tetap curiga akan kelanjutan hubungan mereka dengan Falintil. Dalam beberapa kasus, warga desa yang diberi tugas patroli kemudian diasingkan bersama keluarga mereka ke Pulau Atauro.²²²

195. Profil Komunitas Komisi menunjukkan bahwa di dalam komunitas yang sudah menyerahkan diri atau tertangkap oleh militer Indonesia, perempuan sering dipaksa melakukan jaga malam sementara penduduk laki-laki dipaksa menjadi TBO atau mencari Fretilin/Falintil dan penduduk sipil lainnya di hutan. Komisi diberi tahu tentang penyiksaan para perempuan yang menolak berpartisipasi dalam tugas jaga malam.²²³ Ernesto Soares mengatakan kepada Komisi tentang pemaksaan dengan kekerasan terhadap penduduk sipil:

Pada tahun 1977, pasukan Batalion 711 membangun pos di Desa Leodato (Hatulia, Ermera). Setelah dibangun, Yonif 711 memaksa saya dan teman-teman menjaga pos pada malam hari. Kalau kami menolak untuk datang, kami dipukuli dan dimasukkan ke rawa-rawa.²²⁴

196. Tidak jarang penduduk sipil yang dipaksa melakukan jaga malam mengalami kekerasan jika ABRI atau Hansip yang mengawasi mereka merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Bernardo Savio menjelaskan kepada Komisi bahwa dia dipaksa melakukan tugas jaga malam, dan bila ia dipergoki tertidur selama bertugas, ia akan dipukuli dan disiksa.²²⁵ Orang lain memberi gambaran tentang perlakuan yang sama kepada Komisi.²²⁶ Daniel Suban dari Caraubalo (Viqueque, Viqueque) menceritakan kepada Komisi tentang ayahnya, Rubigari, yang dipaksa melakukan jaga malam:

Pada tanggal 14 Juli 1980, Rubigari, Rai Olo, Rubi Gamu, dan Loi Gamu dipaksa TNI menjaga pos pada malam hari. Ayah saya, Rubigari, jatuh tertidur saat giliran dia berjaga. Dia tertangkap basah oleh 3 anggota TNI Batalion 202 dan dimarahi, ditendang, dipukul dengan senjata sampai tulang rusuknya patah dan langsung meninggal.²²⁷

197. Kekerasan oleh anggota ABRI dan Hansip bersifat sewenang-wenang dan dapat terjadi kapan saja, meski tanpa provokasi apapun. Alfredo da Costa Freitas, misalnya, menggambarkan sebuah kejadian kepada Komisi di mana anggota Hansip memukuli dia dan tiga orang temannya tanpa alasan apapun saat mereka melakukan tugas jaga malam. Mereka kemudian dilempar ke sungai, pos jaga mereka dibakar dan mereka disuruh untuk membangun kembali pos jaga tersebut keesokan harinya.²²⁸

198. Analisa laporan lokakarya Profil Komunitas Komisi menunjukkan bahwa militer Indonesia juga memaksa penduduk sipil untuk ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan lainnya pada malam hari, seperti datang ke pesta dansa dan patroli keamanan jika terdapat banyak aktivitas Fretilin/Falintil di daerah tersebut. Kehadiran orang Timor-Leste di kegiatan-kegiatan tersebut tampaknya ditujukan untuk mengurangi risiko serangan Falintil, jadi penduduk sipil pada dasarnya dipakai sebagai tameng hidup. Penduduk sipil sering dipaksa menyiapkan makanan bagi tentara.²²⁹ Praktik semacam ini sering terjadi di kamp-kamp pemukiman yang dikuasai militer Indonesia pada akhir dekade 1970-an dan awal dekade 1980-an.²³⁰

199. Penduduk sipil yang dipaksa melakukan jaga malam juga berisiko ditembak atau dibunuh oleh Falintil atau anggota ABRI itu sendiri. Komisi menerima sejumlah pernyataan yang memaparkan insiden di mana Falintil atau ABRI membunuh penduduk sipil tidak bersenjata yang tengah bertugas jaga malam.²³¹

200. Selama Operasi Kikis pada 1981, dengan banyaknya penduduk sipil laki-laki sehat yang dipaksa ikut serta dalam operasi tersebut, di beberapa daerah perempuan dipaksa melakukan tugas jaga malam.²³² Penduduk Desa Bibileo (Viqueque, Viqueque) mengatakan kepada Komisi bahwa selama periode ini, ABRI memaksa laki-laki dan perempuan tua membangun pos jaga di sekitar desa, dan perempuan dipaksa bertugas jaga malam.²³³

201. Selama dekade 1990-an, terdapat lebih sedikit laporan tentang penduduk sipil yang direkrut paksa untuk tugas jaga malam. Walaupun hal ini mencerminkan pergeseran situasi konflik dan prioritas keamanan dan strategi militer Indonesia, praktik-praktik ini tetap dilakukan di beberapa daerah tertentu. Beberapa laporan yang diterima Komisi untuk periode ini menunjukkan bahwa penduduk sipil yang dipaksa melakukan tugas jaga malam pada umumnya adalah mereka yang ditangkap karena kegiatan-kegiatan klandestin. Beberapa orang ini juga disiksa oleh anggota militer Indonesia atau kelompok paramiliter binaan mereka. Serangan oleh Falintil selama dekade 1990-an juga menimbulkan korban dari kalangan penduduk sipil yang bertugas jaga malam. Mateus Soares mengatakan kepada Komisi tentang sebuah serangan Falintil terhadap pos di Carlilo, Desa Aiteas (Manatuto, Manatuto):

Pada tanggal 23 Maret 1990, José Soares Laka, Domingos Ramos, Sebastião Ximenes, António Coli, Domingos Larak, Hermenegildo Soares, Mateus Goò, dan ayah saya, António Celo Soares dan saya sedang jaga malam di pos kamling [keamanan lingkungan].

*Sekitar jam 9 malam Fretilin menyerang pos. António Celo Soares langsung terbunuh dalam serangan tersebut, sedang Mateus Go'o, José Soares Laka, dan Domingos Larak terluka akibat penembakan membabitnya dari Falintil.*²³⁴

202. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka yang dicurigai terlibat dalam kegiatan klandestin yang mendukung pasukan Falintil sering disiksa dan kemudian disuruh melakukan jaga malam dan tugas lainnya.²³⁵ Penduduk sipil yang tidak mematuhi perintah untuk tugas jaga malam sering disiksa oleh militer Indonesia.²³⁶

203. Praktik ini dihidupkan kembali dalam skala besar sepanjang 1999, ketika TNI dan milisi memaksa penduduk sipil untuk melakukan tugas jaga malam selain “tugas-tugas” lainnya menjelang Jajak Pendapat pada akhir Agustus.²³⁷ Dalam audiensi Rekonsiliasi Komunitas di desa-desa di seluruh negeri, Komisi mendengar kesaksian dari mantan anggota milisi tentang kegiatan mereka. Perekrutan sering dipaksa, dengan ancaman kekerasan atau penghancuran harta benda oleh militer Indonesia. Pemerintah setempat sering dipakai oleh militer dalam proses perekrutan, karena sebagian besar masyarakat diwajibkan menyediakan anggotanya untuk kelompok milisi. Anggota papan bawah kelompok milisi, yang sering merupakan orang-orang yang dipaksa bergabung, kerap diwajibkan melakukan kegiatan seperti jaga malam dan patroli, dan menjaga pos jaga, dan posisi mereka berada di bawah militer Indonesia seperti dalam periode konflik sebelumnya (lihat Bagian 9: Rekonsiliasi komunitas).

Pelanggaran Hukum Perang oleh Fretilin/ Falintil

204. Komisi menerima sejumlah laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil berkaitan dengan pelanggaran Hukum Perang. Pelanggaran terhadap penduduk sipil dalam konteks ini, bagaimanapun juga, hanya merupakan bagian kecil jika dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh ABRI/TNI. Bukti yang ada menunjukkan bahwa pelanggaran oleh Fretilin/Falintil tidak bersifat sistematis atau luas. Namun demikian, pasukan Fretilin/Falintil menyerang dan membunuh penduduk sipil, membakar rumah-rumah mereka, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran berat lainnya terhadap penduduk sipil.

205. Komisi tidak menemukan bukti penggunaan senjata yang tidak pandang bulu atau yang tidak proporsional selama operasi militer Fretilin/Falintil, atau perekrutan penduduk sipil dalam skala besar oleh Fretilin/Falintil untuk mendukung dan melengkapi operasi militernya. Walau demikian, jelas bahwa upaya Fretilin/Falintil untuk menegakkan ideologi politik dan kebijakan-kebijakan Fretilin/Falintil antara 1976-1978 mengakibatkan banyak penderitaan dan kematian penduduk sipil yang mereka larang untuk menyerahkan diri kepada

militer Indonesia dan yang menjadi sasaran penyerangan ABRI. Fretilin/Falintil juga melakukan pelanggaran hukum perang dalam kaitannya dengan perlakuan tahanan dan pembunuhan penduduk sipil.

206. Ketika militer Indonesia melakukan invasi ke Dili pada 7 Desember 1975, Fretilin mundur ke selatan menuju Bukit Aileu di mana Fretilin mempertahankan markasnya. Pemimpin Fretilin memutuskan membawa-serta banyak tahanan UDT dan Apodeti yang ditahan di *Quartel Geral*, Taibessi, dan Comarca Balide, Dili. Tahanan dipaksa membawa amunisi dan bahan-bahan keperluan untuk Fretilin yang mundur.²³⁸ Pada akhir Desember 1975, anggota Fretilin melakukan serangkaian eksekusi terhadap tahanan-tahanan ini, di Aissirimou di Aileu, kemudian saat mereka mundur lebih jauh ke selatan di Maubisse (Ainaro), dan pada Januari 1976 di pantai selatan Same, Manufahi (lihat Bagian 3: Sejarah konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Komisi mewawancarai Humberto Martins da Cruz, seorang penjaga penjara Fretilin di Aileu saat itu, yang mengatakan bahwa hampir setiap malam satu orang tahanan dipanggil untuk dibunuh. Dia juga mengatakan kepada Komisi bahwa antara 23 dan 26 eksekusi di Aissirimou ini langsung melibatkan anggota Komite Sentral Fretilin.²³⁹ Dia mengatakan kepada Komisi bahwa tahanan diperintahkan menggali lubang bagi korban eksekusi, dan bahwa para pemimpin Fretilin tidak melakukan upaya untuk mencegah eksekusi ini.²⁴⁰ Pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal, Presiden dan Sekretaris Jenderal Fretilin saat Laporan ini ditulis, Francisco Guterres “Lú-Olo” dan Mari Alkatiri, menyatakan bahwa pembunuhan ini bukan kebijakan Fretilin atau dilakukan atas perintah Komite Sentral Fretilin. Mereka, bagaimanapun juga, mengakui bahwa Fretilin sebagai organisasi harus mengambil tanggung jawab kolektif atas pembunuhan ini dan meminta maaf atas nama Fretilin kepada keluarga korban.²⁴¹ Presiden Fretilin saat itu, Francisco Xavier do Amaral, tidak berada di Aileu pada saat pembunuhan; namun demikian, dia menjelaskan pemahamannya tentang kejadian ini kepada Komisi pada saat Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76:

Saya bisa jelaskan demikian. Tidak ada keputusan. Kalau kita menulis sesuatu, maka kita bisa katakan bahwa ini keputusan. Kadang kita ngomong tentang kesan kita, kita bicara dengan teman. Dan ide kita ini, orang bilang – orang bilang–dianggap sebagai keputusan. Karena pikiran kita hanya pendapat kita...

“Kita dalam keadaan perang, dalam perang ini, kalau kita mundur, lawan mengejar kita; jika kita mundur kita membawa serta tahanan, [yaitu] lawan kita yang menjadi tahanan kita. Di saat kita belum sempat mengambil napas, lawan sudah mendekat. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Kita harus terus berlari. Kita tidak punya banyak pilihan. Tidak ada transportasi, tidak ada makanan, terkadang tidak ada obat-obatan, tidak ada semuanya ini.” Sebagian tahanan dalam keadaan sakit keras, sebagian sudah sangat lemah. Jadi kami harus memperhatikan semua ini. Apakah kami merawat mereka? Apakah kami akan meninggalkan mereka sendirian?

Atau kami harus membunuh mereka sebelum kami menyingkir? Dari kedua [kemungkinan] ini, saya melihat ada bahayanya. Kalau kami meninggalkan mereka dalam keadaan hidup, mereka pasti jatuh ke tangan lawan. Jadi kalau kami meninggalkan satu tahanan, misalnya salah seorang anggota UDT atau Apodeti, ia bisa saja jatuh ke tangan musuh. Jika pasukan Indonesia masuk, dia bisa jatuh ke tangan mereka. [Pasukan] Indonesia akan menekan dia dan mereka akan menemukan kami. Mereka dapat menipu dia atau mungkin dia akan mengaku ... [Apakah kami] berada di kota atau di mana saja, dia bisa mengaku. Oleh karena itu kami sampai kepada kesimpulan bahwa jika mereka sudah dalam lemah dan mereka tidak berjalan dengan kami, kami ingin membawa mereka tetapi kami tidak punya kekuatan, tidak ada jaminan bahwa kami bisa membawa mereka ke mana kami pergi, maka pilihannya adalah apakah dia yang mati atau kami yang mati? Kadang-kadang, keputusan diambil untuk membunuh mereka supaya musuh tidak membahayakan kami. Mungkin opini ini dipegang secara umum, lebih- kurang, di semua level di kalangan pemimpin.²⁴²

207. Pada kenyataannya, meski ada bukti bahwa beberapa tahanan lemah dan sakit, atau menderita luka dari pemukulan yang kejam saat ditahan Fretilin, tetapi tidak ada bukti bahwa tahanan dieksekusi karena terlalu sulit untuk bergerak. Bukti menunjukkan bahwa mereka dieksekusi anggota Fretilin karena khawatir mereka akan bekerjasama dengan Indonesia.

208. Komisi menerima kesaksian tentang pembantaian penduduk sipil di Desa Kooleu (Loré I, Lautém) pada Januari 1976 (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).²⁴³

209. Setelah eksekusi Januari 1976 di Same (Manufahi), para pemimpin Fretilin memutuskan untuk menghentikan eksekusi dan mendorong tahanan yang masih hidup untuk bertempur dengan mereka melawan militer Indonesia. Taur Matan Ruak, sekarang Panglima Angkatan Bersenjata RDTL, mengingat di hadapan Komisi kata-kata pemimpin Fretilin Nicolau Lobato, dan mengulang kembali kata-kata tersebut:

Kita percaya dengan perubahan manusia. Sejarah perjuangan di negara lain membuktikan bahwa seorang yang dianggap revolusioner sekarang bisa dianggap sebagai pengkhianat besok, dan bahwa seorang yang dianggap pengkhianat hari ini bisa dianggap revolusioner besok... akal sehat manusia bisa memperbaiki manusia. Kita harus mempercayai kemampuan orang untuk mengubah diri mereka.²⁴⁴

210. Selama periode setelah invasi, banyak orang meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di hutan dan gunung. Banyak orang yang lari atas kemauan sendiri karena takut invasi dan mencari perlindungan kepada pasukan Fretilin/Falintil. Namun demikian, Komisi juga menerima banyak kesaksian tentang Fretilin

yang mendorong penduduk sipil untuk meninggalkan kota dan bergabung dengan Fretilin di pedalaman, dan ideologi revolusi sosial Fretilin pada tahun-tahun awal ini berkaitan dengan perang dan pendudukan didasarkan pada pandangan tentang penduduk sipil yang hidup bersama kader politik dan militer di mana mereka bisa dididik dan kesadaran sosial baru bisa muncul. Dalam konteks ini ada banyak tekanan bagi penduduk sipil untuk melarikan diri dan tinggal bersama Fretilin di pedalaman, bahkan saat situasi menjadi sangat sulit (lihat Bab 7.3.: Pindahan paksa dan kelaparan).

211. Antara 1976 dan 1977, penduduk sipil mendirikan komunitas-komunitas baru di bawah bimbingan Fretilin di basis-basis di pedalaman di belakang garis pertempuran dengan militer Indonesia. Mereka menanam kebun komunal, menjalankan program pemberantasan buta huruf, dan mengembangkan pelayanan kesehatan dasar. Namun demikian, ketika perang makin merasuk pada 1977, semakin sulit bagi Fretilin untuk mempertahankan jumlah penduduk yang besar tersebut di pedalaman.

212. Perpecahan muncul di kalangan pimpinan Fretilin tentang strategi terbaik untuk melanjutkan perjuangan, terutama tentang persoalan apakah penduduk sipil yang jumlahnya sangat besar harus menyerah dan kembali ke desa-desa dan kota-kota. Pada 1976 di Zona Timur, Fretilin/Falintil menangkap dan mengeksekusi pemimpin Falintil Aquiles Freitas dan sejumlah pendukungnya (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

213. Perpecahan paling dalam dan penuh kekerasan terjadi dengan ditangkap dan ditahannya Presiden Francisco Xavier do Amaral dan mereka yang dicurigai satu garis dengannya pada September 1977. Dalam waktu ini, Fretilin/Falintil melakukan pelanggaran terhadap banyak penduduk sipil, termasuk penahanan, penyiksaan, dan eksekusi (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan).²⁴⁵

214. Setelah pembersihan yang penuh kekerasan ini, kecurigaan semakin dalam di wilayah-wilayah yang dikuasai Fretilin/Falintil dan pergerakan penduduk sipil diawasi ketat. Fretilin/Falintil mewajibkan penduduk sipil untuk memiliki surat jalan (atau dikenal dengan nama *Guia de Marcha*). Mereka yang ditangkap di luar wilayah yang diperbolehkan dituduh berkhianat dan dihukum. Hukuman termasuk penahanan dengan kondisi yang sangat buruk, penyiksaan, dan kadang pembunuhan. Fretilin membangun suatu sistem pusat penahanan yang dikenal dengan nama *Renal* di basis-basis di seluruh negeri. Mereka sering menahan orang di lubang di tanah sampai dua minggu, dan lebih lama di *Renal* (lihat Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan).

215. Pemimpin Fretilin/Falintil lain yang berlawanan dengan strategi perang Fretilin untuk mempertahankan kehadiran penduduk sipil di pedalaman juga dihukum atau dibunuh.²⁴⁶ Mereka termasuk Afonso Savio, Sekretaris Zona untuk daerah Luro (Lautém) dan José dos Santos, komandan regional, yang dipukuli, diinjak, dan dibakar sampai mati.²⁴⁷ Menurut beberapa laporan yang masuk ke Komisi, para

anggota Komite Sentral Fretilin memerintahkan eksekusi kepala kampung yang dituduh menyuruh penduduk sipil untuk menyerah kepada militer Indonesia.²⁴⁸ Tindakan semacam ini memberi pesan jelas kepada penduduk sipil yang mempunyai keinginan untuk menyerah bahwa mereka akan dianggap sebagai pengkhianat dan akan dihukum berat.

216. Persoalan apakah penduduk sipil harus menyerah menjadi sumber perpecahan yang dalam, dengan kesejahteraan penduduk sipil yang sering dikorbankan antara cita-cita politik yang berseberangan. Lucas da Costa, kader Fretilin saat itu, mengatakan kepada Komisi:

*Kalau seorang pemimpin politik berbicara, komandan [Falintil] mematuhi. Tetapi komandan hanya melihat perang dari sudut pandang militer. Mereka bilang, "kita tidak akan bisa menang kalau kita bawa orang-orang ini dengan kita. Kalau orang terus ikut kita akan menghabiskan tenaga melindungi mereka, bukan untuk bertempur melawan musuh. Lebih baik suruh mereka pergi, kita akan tinggal di hutan." Tetapi ini tidak sesuai dengan konsep [Fretilin]. Kalau orang-orang disuruh turun [dari gunung], mereka akan mendapatkan kembali status sosial mereka dan status sosial mereka akan meningkat lagi. Ini namanya membunuh ideologi sendiri, dan revolusi akan gagal.*²⁴⁹

217. Banyak penduduk sipil yang pada dasarnya terperangkap di *Zona Libertadas* atau zona bebas Fretilin, yang kemudian menjadi sasaran serangan ABRI/TNI. Dengan pembatasan pergerakan penduduk sipil menjadi lebih ketat, banyak penduduk sipil mati karena kekurangan makanan dan obat-obatan.²⁵⁰ Setelah operasi militer besar-besaran Indonesia menghancurkan basis-basis Fretilin/Falintil pada 1978, banyak penduduk sipil yang melarikan diri bersama pasukan Fretilin/Falintil ke basis Fretilin/Falintil di Gunung Matebian. Situasi di sana sedikit lebih baik, meski sangat kekurangan tempat perlindungan dan obat-obatan untuk orang dewasa dan anak-anak yang sakit. Dalam situasi ini ribuan orang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan pengeboman dan serangan Indonesia yang tanpa henti.²⁵¹

218. Pada 1978, dalam kondisi tercerai-berai dan tanpa pilihan apapun, banyak penduduk sipil mulai menyerahkan diri kepada pasukan Indonesia. Pada 22 November 1978, Komite Sentral Fretilin mengeluarkan perintah yang secara efektif mengakui realitas ini.

219. Xanana Gusmão, yang berada di Gunung Matebian ketika itu, mengatakan kepada Komisi:

Pada tanggal 22 November 1978 kami berpisah di Matebian. Meski kami dikepung, kami tetap berhubungan dengan Komite Sentral di Wilayah Tengah. Kami mengakui, kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan mereka menyuruh penduduk sipil untuk menyerah dan mempertahankan satu pos gerilya di Wilayah Timur yang membawahi Baucau, Viqueque dan Lospalos...

Kemudian mereka menunjuk saya sebagai komandan Wilayah Timur, dan pada tanggal 22 November kami memobilisasi kekuatan kami, menyelamatkan diri dari Matebian, dan menyuruh penduduk sipil untuk menyerah di kota-kota terdekat sementara Falintil bergerak menuju Wilayah Tengah untuk melanjutkan perjuangan.²⁵²

220. Dengan berakhirnya Operasi Seroja dan kehancuran basis-basis Fretilin, Resistansi bersenjata hampir dipatahkan. Strategi Resistansi diubah total dalam sebuah konferensi reorganisasi nasional pada 1981 (lihat Bagian 3: Sejarah onflik). Ini berarti bahwa banyak penduduk sipil tidak lagi tinggal bersama pejuang resistansi bersenjata di gunung. Penduduk kembali ke desa-desa dan kota-kota, meski sering setelah menjalani waktu lama tinggal di kamp-kamp sementara, pusat penahanan, dan desa-desa pemukiman yang diawasi ABRI/TNI (lihat Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan). Hubungan Fretilin/Falintil dengan penduduk sipil berubah total, karena mereka berupaya mendorong berkembangnya jaringan klandestin penduduk sipil untuk mendukung Resistansi. Pemimpin baru Resistansi, Xanana Gusmão, secara bertahap menuntun Resistansi menjauhi posisi ideologi yang kaku yang telah mendorong berkembangnya kekerasan “ideologis” atau “revolusioner” terhadap anggota Resistansi mereka sendiri (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Dalam otobiografinya, Xanana Gusmão mengenang kekerasan yang dia saksikan atau dengar tentang periode awal tersebut, dan gagasannya untuk menjauhkan Resistansi dari pendekatan tersebut.²⁵³

Tidak! Meskipun saya anggota Komite Sentral, saya masih tidak bisa memahami kekerasan revolusioner. Saya tidak suka konsepnya dan saya tidak menjalankannya. Persuasi dan kompensasi mulai menjadi prinsip politik alternatif, yang sangat penting bagi saya.²⁵⁴

221. Masa-masa setelah reorganisasi Resistansi setelah kehancuran basis-basis yang menampung banyak penduduk sipil, pelanggaran hukum perang Fretilin/Falintil, terutama terhadap penduduk sipil, turun drastis. Meskipun demikian, Komisi menerima laporan tentang kekerasan dan intimidasi Falintil terhadap mereka yang dianggap bekerjasama dengan militer Indonesia atau yang melawan Resistansi. Hal ini termasuk pelanggaran yang paling berat, seperti eksekusi penduduk sipil.²⁵⁵ Marta Ximenes memberi kesaksian bahwa pada 17 Agustus 1979, tiga tentara Falintil menembak mati suaminya Luis Lopes di kebun mereka di Paitaal-Bauro (Lospalos, Lautém) dan mencuri tanaman jagung dan ketela mereka.²⁵⁶

222. Dalam kasus di mana penduduk sipil Timor-Leste dipaksa militer Indonesia untuk melakukan tugas seperti jaga malam dan patroli, seperti dibahas dalam paragraf 193 – 203, mereka kadang menjadi korban aksi bersenjata Falintil. Status orang-orang semacam ini mungkin tidak jelas, dan mungkin tergantung pada peran yang terpaksa mereka jalankan dari militer Indonesia. Seorang anggota Pasukan Tombak yang berpatroli di hutan bisa menjadi ancaman militer bagi anggota Falintil.* Namun, situasi orang yang dipaksa melakukan jaga malam

* Misalnya kematian seorang anggota Pasukan Tombak, Jacinto Pinto, yang disebut dalam paragraf 191 di atas, lihat Pernyataan HRVD 04439.

dan patroli di desanya akan sangat berbeda. Apakah mereka dijadikan sasaran ataukah korban semacam itu dibunuh karena pemakaian tingkat kekerasan yang berlebihan yang tidak sebanding dengan tujuan militer tidak selalu jelas.’ Komisi tidak menerima bukti apapun yang menunjukkan bahwa Falintil secara umum menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran, dan juga tidak ada bukti bahwa Falintil melancarkan operasi militer dengan cara yang secara langsung menimbulkan korban sipil. Tetapi kekerasan semacam ini oleh pasukan Falintil, sepanjang dekade 1980-an dan lebih jarang pada dekade 1990-an, menimbulkan penderitaan yang hebat dalam masyarakat.

Serangan terhadap objek-objek sipil

223. Pernyataan yang diterima Komisi memerinci 80 kasus pembakaran rumah, perusakan bangunan dan harta benda, serta penjarahan oleh Fretilin/Falintil antara 1975 dan 1979. Sebagian besar insiden ini terjadi pada 1976, dan sebagian besar dilaporkan oleh penduduk desa di Distrik Viqueque dan Baucau. Beberapa laporan memberi perincian tentang pelanggaran Fretilin/Falintil pada tahun-tahun setelahnya, termasuk penghancuran rumah penduduk dan bangunan lain dan menjarah di 11 distrik di Timor-Leste. Tidak ada laporan yang diterima dari Liquiçá dan Oecussi.

224. Penduduk Desa Obulo dan Batumanu (Atsabe, Ermera) mengatakan kepada Komisi bahwa pada 1977 setelah militer Indonesia menyerang dan membakar rumah-rumah di Obulo, sejumlah penduduk desa menyerahkan diri ke ABRI. Setelah itu Falintil menyerang dan membakar rumah-rumah milik penduduk yang menyerah. Pasukan Falintil juga dilaporkan menyerang dan membakar rumah-rumah di Obulo dan Atsabe dan memaksa penduduk desa pergi bersama mereka ke hutan pada Februari 1977. Banyak penduduk sipil yang dibawa pergi menderita kelaparan, penyakit, dan kematian.²⁵⁷

225. Tampak jelas bahwa ada pasukan Fretilin/Falintil bertanggung jawab atas kerusakan berat dan penderitaan di kalangan penduduk sipil. Namun hal yang tidak jelas adalah apakah kebijakan resmi memerintahkan serangan-serangan atas warga sipil dan harta benda mereka. Fakta bahwa pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan di berbagai distrik, dan dalam periode yang berbeda, menunjukkan bahwa paling tidak para pemimpin Falintil pasti mengetahui tentang serangan-serangan tersebut dan tidak mengambil tindakan untuk mencegah serangan-serangan tersebut.

* Lihat misalnya kasus yang disebutkan di atas tentang pembunuhan António Coli dan Celso Soares di pos keamanan kampung pada 1990 oleh pasukan Falintil yang menyerbu [lihat Pernyataan HRVD 06483].

Temuan

Temuan-temuan berkaitan dengan angkatan bersenjata Indonesia

226. Selama invasi Timor-Leste anggota ABRI/TNI melakukan pelanggaran konvensi-konvensi Jenewa secara sistematis dengan tidak membedakan sasaran sipil dan militer. Lebih jauh, pada hari-hari awal invasi, penduduk sipil dijadikan sasaran oleh militer Indonesia dalam pembantaian dan eksekusi.

227. Dalam operasi militer skala besar setelah invasi awal, ribuan penduduk sipil Timor-Leste, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak bersenjata dan tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, dijadikan sasaran atau secara sewenang-wenang dibunuh oleh militer Indonesia.

228. Selama operasi-operasi militer, anggota ABRI/TNI secara rutin menyiksa dan membunuh penduduk sipil dan tawanan perang yang tertangkap. Tawanan yang dieksekusi termasuk perempuan mengandung dan anak-anak (lihat Bab 7.8: Hak-hak anak).

229. Anggota ABRI/TNI secara rutin membunuh, menahan, dan menyiksa orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung Fretilin/Falintil. Hukuman bagi yang menentang pendudukan juga termasuk rumah mereka dibakar, tanah dirampas, dan harta benda dibagi-bagikan kepada pendukung politik pendudukan, dan perkosaan perempuan yang dicurigai bekerjasama dengan Resistansi.

230. Anggota ABRI/TNI secara sistematis melanggar kewajiban hukum internasional dengan menggunakan hukuman kolektif terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan-tujuan militer. Ini termasuk penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, atau pemindahan paksa penduduk sipil karena mereka merupakan anggota keluarga dari, atau berasal dari komunitas yang sama dengan, orang-orang dicurigai sebagai anggota Fretilin/Falintil.

231. Anggota ABRI/TNI secara sistematis menghancurkan harta benda, termasuk gedung-gedung dan harta pribadi penduduk sipil sebagai bagian rutin operasi militer. Salah satu tujuan penghancuran ini adalah untuk menghukum penduduk Timor-Leste yang menentang pendudukan, dan menciptakan iklim ketakutan yang diharapkan dapat membuat penduduk lebih mudah dikendalikan, serta mencegah dukungan terhadap gerakan prokemerdekaan.

232. Penjarahan untuk keuntungan pribadi perwira ABRI/TNI sering menyertai aktivitas mereka selama operasi militer. Ini termasuk mencuri kendaraan yang diangkut ke kapal-kapal perang, pengangkutan kendaraan, barang dan ternak ke Timor Barat untuk dijual, penjarahan benda-benda tradisional yang tidak dinilai harganya dan tidak bisa digantikan yang memiliki nilai spiritual dan budaya yang penting, dan tindakan-tindakan kejahatan bersenjata pada umumnya terhadap penduduk sipil. Pejabat pemerintah setempat, yang bertindak di bawah perlindungan

ABRI/TNI, juga berpartisipasi dalam penjarahan dan pencurian dari warga sipil yang dicurigai menentang pendudukan.

233. Penghancuran dan penjarahan harta benda penduduk sipil sering disertai dengan pelanggaran lain, seperti pemukulan, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan penduduk sipil. Cara umum adalah penjarahan harta benda, pembunuhan penghuni rumah, dan pembakaran rumah dengan korban-korbannya yang masih di dalam. Cara ini digunakan untuk menghukum dan mengintimidasi lawan-lawan pendudukan dan menghancurkan bukti pelanggaran.

234. Anggota ABRI/TNI secara sistematis menghancurkan sumber-sumber makanan penduduk sipil. Ini termasuk pembakaran tanaman pangan dan pembantaian ternak. Pelanggaran-pelanggaran ini mempunyai akibat yang luarbiasa bagi penduduk sipil Timor-Leste dan secara langsung menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang sangat besar pada dekade 1970-an karena kelaparan dan penyakit.

235. ABRI/TNI menggunakan senjata yang dilarang oleh hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata dalam operasi militernya di Timor-Leste. Ini termasuk senjata kimia yang meracuni sumber air, membinasakan tanaman pangan dan tanaman lainnya, serta mengakibatkan kematian dengan meracuni penduduk sipil.

236. ABRI/TNI menjatuhkan bom napalm dan alat-alat pembakar yang lain tanpa pandang bulu terhadap sasaran sipil. Penggunaan bom-bom yang tidak sah ini menyebabkan penderitaan yang luarbiasa terhadap penduduk sipil, termasuk kematian dengan pembakaran hidup-hidup penduduk laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak bersenjata.

237. ABRI/TNI merekrut paksa ribuan laki-laki, perempuan dan anak-anak Timor-Leste untuk membantu mereka dalam operasi-operasi militer mereka, terutama selama 1975-1979, dan selama periode-periode peningkatan operasi militer, di seluruh penjuru Timor-Leste. Mereka yang menolak berpartisipasi dipukuli dan disiksa. Perekrutan paksa ilegal atas penduduk sipil ke dalam operasi-operasi militer dilakukan untuk mendapatkan bantuan praktis dan murah dan juga meruntuhkan semangat orang-orang yang menentang pendudukan.

238. Penduduk Timor-Leste yang direkrut paksa untuk bergabung dengan unit-unit ABRI/TNI secara rutin dipaksa membawa beban berat berupa makanan, amunisi, dan peralatan dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka sering mendapat perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

239. Anggota ABRI/TNI membunuh penduduk sipil Timor-Leste yang dipaksa ikut dalam operasi militer Indonesia, karena masalah ketidakpatuhan dan disiplin.

240. Perempuan muda Timor-Leste yang dipaksa bekerja untuk anggota ABRI/TNI secara rutin diperkosa dan dipaksa hidup dalam perbudakan seksual bagi tuan-tuan militer mereka (lihat Bab 7.7: Pelanggaran seksual).

241. Banyak pendukung prokemerdekaan yang ditangkap atau yang menyerah disiksa, kemudian dipaksa melakukan tugas jaga malam atau tugas keamanan lain. Jika mereka

gagal dalam menjalankan tugas tersebut mereka semakin disiksa atau mengalami penganiayaan. Beberapa pejuang Falintil yang ditangkap dipaksa bertindak sebagai pasukan Indonesia melawan Falintil, hanya dipersenjatai tombak, untuk memastikan agar mereka tidak dapat memberontak melawan komandan ABRI/TNI mereka. Hal ini menempatkan mereka dalam bahaya langsung dalam situasi pertempuran dan mengakibatkan kematian.

242. Dalam sejumlah kasus, penduduk Timor-Leste yang dipaksa ikut dalam operasi ABRI/TNI terbunuh oleh Falintil dalam operasi-operasi tersebut.

243. Sebelum Jajak Pendapat pada 1999, ABRI/TNI membentuk kelompok-kelompok milisi pro-integrasi di seluruh wilayah. ABRI/TNI menerapkan program perekrutan paksa terhadap ribuan pemuda Timor-Leste ke dalam kelompok-kelompok ini secara sistematis, di samping mereka yang sudah bergabung secara sukarela dengan imbalan bayaran. Kelompok milisi yang terlibat dalam program kekerasan dan penghancuran yang terorganisasi ini dibentuk dengan sengaja, dipersenjatai, dibiayai, dan diperintah oleh militer Indonesia. Bukti yang berlimpah mengenai hubungan ini dibahas di Bagian 4: Rezim pendudukan, dan pertanggungjawaban atas tindakan ini dibahas di Bagian 8: Tanggung jawab dan pertanggungjawaban.

244. Anggota ABRI/TNI melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala yang luas dan sistematis, termasuk pelanggaran hukum perang, menjelang Jajak Pendapat pada 1999. Pelanggaran ini dibahas secara terperinci di bab-bab yang bersangkutan tentang pelanggaran hak asasi manusia, yaitu Bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan; Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan; Bab 7.8: Pelanggaran seksual; Bab 7.9: Hak ekonomi dan sosial.

245. Program kekerasan dan penghancuran pada 1999 merupakan serangan sistematis oleh kelompok militer dan milisi dengan senjata lengkap dan terorganisasi terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata dan tidak berdaya. Ini tidak melibatkan konflik antara dua kelompok bersenjata, karena Falintil, dengan beberapa perkecualian, tidak terlibat konflik. Ini merupakan aksi militer besar-besaran dengan sasaran penduduk sipil dengan tujuan memaksa mereka memilih tetap bersama Indonesia, dan, setelah hasil diumumkan, menghukum mereka karena tidak menuruti. Praktik militer yang menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran ini merupakan pelanggaran hukum perang oleh militer Indonesia.

246. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia dan milisi binaan mereka sepanjang 1999 termasuk:

- Membunuh lebih daripada 1.400 penduduk sipil
- Perkosaan dan pelanggaran seksual terhadap ratusan perempuan
- Penyerangan dan pemukulan ribuan penduduk sipil
- Deportasi paksa sekitar 250.000 penduduk sipil dan pemindahan paksa sekitar 300.000 dari wilayah Timor-Leste
- Perekrutan paksa ribuan penduduk Timor-Leste ke dalam kelompok milisi

- Pembakaran lebih daripada 60.000 rumah penduduk sipil
- Penjarahan harta benda penduduk sipil dalam skala besar, termasuk hampir semua sepeda motor dan barang-barang berharga, yang dibawa melintasi perbatasan ke wilayah Indonesia
- Pencurian dan pembantaian ternak dalam jumlah besar
- Penghancuran secara sengaja sebagian besar infrastruktur publik bukan untuk tujuan militer, termasuk semua rumah sakit, sebagian besar sekolah, instalasi air, generator listrik, dan peralatan lain untuk menopang kesejahteraan masyarakat
- Penjarahan benda-benda budaya dan sejarah yang penting dan tidak ada duanya dari museum di Dili pada September 1999, dan membawa benda-benda ini ke Timor Barat, Indonesia

Temuan mengenai pelanggaran oleh Fretilin/Falintil

247. Portugal merupakan penguasa administratif Timor-Leste yang diakui oleh PBB selama periode konflik dan selama masa pendudukan Indonesia. Portugal telah meratifikasi Konvensi Jenewa ketiga.

248. Hukum perang berlaku bagi Fretilin/Falintil, yang bisa diakui dalam hukum humaniter internasional sebagai gerakan resistansi karena secara umum memenuhi persyaratan bagi pengakuan semacam itu: Fretilin mempunyai struktur komando; anggotanya pada umumnya membedakan diri dengan penduduk sipil, membawa senjata secara terbuka; dan melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Fretilin/Falintil karena itu diwajibkan menaati Konvensi Jenewa.

249. Selama periode pendudukan Indonesia anggota pasukan Fretilin/Falintil terlibat dalam pelanggaran hukum perang, termasuk menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran, pembunuhan, penyiksaan, pembakaran rumah, dan perusakan harta benda secara sengaja. Walaupun sangat berat, skala pelanggaran yang dilakukan anggota Fretilin/Falintil merupakan bagian yang kecil dibandingkan pelanggaran yang dilakukan ABRI/TNI.

250. Anggota Fretilin/Falintil membunuh tahanan dari partai politik UDT dan Apodeti dalam tahanan mereka, tidak lama setelah invasi pasukan Indonesia pada akhir 1975 dan awal 1976, dan penduduk sipil di Desa Kooleu (Loré I, Lautém) pada Januari 1976.

251. Anggota Fretilin/Falintil mengeksekusi penduduk sipil yang dicurigai menjadi kolaborator pasukan keamanan Indonesia, anggota organisasi mereka sendiri yang dicurigai tidak setia, dan penduduk sipil yang bermaksud untuk menyerah kepada ABRI dan melanggar kebijakan Fretilin bahwa mereka harus tetap bertahan bersama Fretilin/Falintil di gunung. Anggota Fretilin/Falintil juga menahan, menyiksa, dan memberikan penganiayaan kepada penduduk sipil dan kader politik dan militer Fretilin/Falintil pada dekade 1970-an yang mereka curigai mempunyai pandangan yang menentang kebijakan Fretilin/Falintil terutama dalam kaitannya dengan

persoalan apakah penduduk sipil harus meninggalkan basis Fretilin/Falintil di pedalaman dan kembali ke desa-desa dan kota-kota.

252. Anggota Fretilin/Falintil menyiksa dan memberikan penganiayaan terhadap penduduk sipil yang dicurigai tidak setia atau bekerjasama dengan militer Indonesia. Cara penyiksaan yang digunakan termasuk menahan orang di lubang bawah tanah, pemukulan, diinjak-injak dan dibakar hidup-hidup.

253. Anggota Fretilin/Falintil menyerang dan membakar rumah-rumah milik penduduk sipil yang menyerah kepada ABRI/TNI, dan mereka yang dicurigai bekerjasama dengan militer Indonesia. Penghancuran ini mengakibatkan kelaparan, penyakit, dan penderitaan bagi penduduk sipil, dan serangan-serangan tersebut mengakibatkan kematian penduduk sipil.

Catatan Akhir

1. Peraturan UNTAET 2001/10, Bagian 3 dan 1 (c)
2. Mário Lemos Pires, kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
3. Wawancara, CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004
4. Lihat APV Rogers, *Law on the Battlefield* (Edisi kedua), Manchester, Manchester University Press, 2004, hal. 3-23.
5. Artikel 25 Peraturan Den Hague; Artikel 27 Konvensi Jenewa IV; Artikel 51 (2) dan 57 (1) dan 2 (a) Protokol Jenewa I; Artikel 52 (1) Protokol Jenewa I.
6. Artikel 51 (2) Protokol Jenewa I.
7. Artikel 51 (4) Protokol Jenewa; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1986) ICJ Report paragraf 78.
8. Artikel 51 (5)(b) dan Artikel 57 (2)(a)(iii) dan (b) Protokol Jenewa I
9. Artikel 57 (3) Protokol Jenewa I.
10. Artikel 26 Peraturan Den Hague; Artikel 57 (c) Protokol Jenewa I.
11. Lihat misalnya, Pernyataan HRVD 00691; 01301; 01466; 06699; 06976; 08149 dan 04200.
12. Pernyataan HRVD 00445.
13. Pernyataan HRVD 08200.
14. Pernyataan HRVD 02406.
15. Profil Komunitas CAVR, Desa Laimea Kraik, Subdistrik Atsabe, Distrik Ermera, 20 Agustus 2003.
16. Lihat misalnya, Dokumen Riset CAVR tentang Pemandahan Paksa dan Kelaparan, Arsip CAVR; Profil Komunitas CAVR, Subdistrik Maubisse, Distrik Ainaro, Mei - Agustus 2003.
17. Wawancara CAVR dengan Agustino Soares, Hatulia, Ermera, 13 Agustus 2003.
18. Profil Komunitas CAVR, Desa Muapitine, Subdistrik Lospalos, Distrik Lautém, 18 Februari 2004.
19. Wawancara CAVR dengan mantan tentara ABRI/TNI di Same (nama dirahasiakan), 13 Agustus 2004.
20. Ibid
21. Maria José da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemandahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
22. Lihat misalnya Profil Komunitas CAVR, Desa Atara dan Salaun, Subdistrik Atsabe, Distrik Ermera, 14 April 2003; Profil Komunitas CAVR, Desa Maununo, Subdistrik Ainaro, Distrik Ainaro, 24 Januari 2003.
23. Profil Komunitas CAVR, Desa Aiasa, Bobonaro dan Malilait, Subdistrik Bobonaro, Distrik Bobonaro, 17 Desember 2003.

24. Wawancara CAVR dengan Adriano João, mantan asisten politik Fretilin untuk Zona Cailaco (Bobonaro) antara tahun 1975 dan 1979, Dili, 6 September 2004.
25. Profil Komunitas CAVR, Desa Aidantuik, Subdistrik Suai, Distrik Covalima, 1 Desember 2003
26. Pernyataan HRVD 00432.
27. Lihat misalnya Profil Komunitas CAVR, Desa Tirilolo, Subdistrik Iliomar, Distrik Lautém, 8 Juli 2003; Profil Komunitas CAVR, Desa Lelalai, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 20 Oktober 2003; Profil Komunitas CAVR, Desa Maluro, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 27 Oktober 2003; Desa Uailili, Subdistrik Baucau, Distrik Baucau, 28 Oktober 2003; dan Desa Baduholo dan Uai-Kana, Subdistrik Venilale, Distrik Baucau, CAVR, 6 Mei 2003.
28. Profil Komunitas CAVR, Desa Defawasi, Subdistrik Baguia, Distrik Baucau, 23 September 2003.
29. Misalnya, lihat Profil Komunitas CAVR, Desa Raihun, Subdistrik Tilomar, Distrik Covalima, 21 Oktober 2003.
30. Profil Komunitas CAVR, Desa Asbilitoho, Subdistrik Liquidoe, Distrik Aileu, 3 September 2003.
31. Profil Komunitas CAVR, Desa Orlalan, Subdistrik Laclubar, Distrik Manatuto, 24 Agustus 2003.
32. Wawancara CAVR dengan Albino da Costa, Dili, Juni 2003.
33. *Asian Wall Street Journal*, "Is There Enough to Eat in East Timor?", 21 Juni 1982.
34. Xanana Gusmão, Pesan kepada Sidang Umum PBB ke-37, di Niner, hal. 81.
35. Wawancara CAVR dengan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004; dan António Soares (tidak ada tanggal). Lihat juga José Gomes, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, 19-21 November 2003.
36. CAVR, Wawancara dengan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004
37. CAVR, Wawancara dengan Gerónimo da Costa Amaral, Viqueque, 10 Maret 2004.
38. J. Henckaerts dan L. Doswald-Beck, *ICRC's Customary International Humanitarian Law, Vol I: Rules*, (2005) hal 46
39. Lihat Bank Dunia, Final Report of the Joint Assessment Mission to East Timor, 8 Desember 1999, Arsip CAVR. Lihat juga Bagian 3: Sejarah konflik.
40. CAVR, Wawancara dengan Rui Emeliano Texeira Lopes, Suai, Covalima, Maret 2003.
41. CAVR, Wawancara dengan Santana de Jesus Soares Ly, mantan OPMT Koordinator Baucau pada tahun 1975, Baucau, 10 Oktober 2003.
42. Pernyataan HRVD 01741.
43. Pernyataan HRVD 00941; 03558; 02167; 0913; 01043; 09471 dan 06443; dan Profil Komunitas CAVR: Desa Ponilala, Poetete dan Mirtutu, Subdistrik Ermera, Distrik Ermera, 19-21 Januari 2004.
44. Pernyataan HRVD 03855 dan 04216.
45. Pernyataan HRVD 02246; 02256 dan 00704.
46. Pernyataan HRVD 07171
47. Pernyataan HRVD 03892
48. Album Kenangan Perjuangan Siliwangi [tak ada informasi bibliografi], hal. 601.
49. Pernyataan HRVD 04044.
50. Pernyataan HRVD 01182.
51. Pernyataan HRVD 03116.
52. Pernyataan HRVD 02589.
53. Pernyataan HRVD 02406.
54. Pernyataan HRVD 05011.
55. Pernyataan HRVD 01352.
56. Pernyataan HRVD 0983.
57. Pernyataan HRVD 01120; 06777; 05643 dan 03663
58. Pernyataan HRVD 00512.
59. Pernyataan HRVD 00512.
60. Pernyataan HRVD 07774.
61. Pernyataan HRVD 03852.
62. Pernyataan HRVD 01348; 04928; 04045 dan 05412.
63. Pernyataan HRVD 04178.

64. Pernyataan HRVD 02044; 06322 dan 06288
65. Pernyataan HRVD 03503 dan 01063
66. Pernyataan HRVD 02317; 03111; 04181; 06074 dan 07363.
67. Pernyataan HRVD 02813.
68. Lihat misalnya, Pernyataan HRVD 01348
69. Pernyataan HRVD 02254 dan 01649
70. Pernyataan HRVD 04045.
71. Pernyataan HRVD 04901; 07235; 07253; 07238; 07085; 03876; 00584 dan 07791
72. Pernyataan HRVD 03695; 08037;09120; 03602; 01022; 05079; 01022; 01702; 08042; 00918; 00298; 00966; 03504; 08042; 00918; 00298; 00966; 03504; 05450; 04599; 04712; 06487; 00625 dan 07527.
73. Pernyataan HRVD 0797
74. Pernyataan HRVD 00427.
75. Pernyataan HRVD 04334 dan 08217
76. Pernyataan HRVD 03462.
77. Pernyataan HRVD 05621 dan 02294
78. Pernyataan HRVD 03366.
79. Pernyataan HRVD 01985.
80. Pernyataan HRVD 01262; 08531; 04285, 05684
81. Pernyataan HRVD 03845.
82. Pernyataan HRVD 08077 dan 08044.
83. Pernyataan HRVD 02520; 06248; 08375; 08342 06418; 06369; 06408; 02512 dan 08290.
84. ETHRC, 28 Februari 1999, "Escalating Violation in East Timor: Is a Peaceful Solution Possible?" Lihat juga Pernyataan HRVD 01531; 01581; 01583; 01603 dan 01518.
85. Pernyataan HRVD 09022.
86. Pernyataan HRVD 00456; 02326; 00082; 05881; 00289 dan 02990.
87. Pernyataan HRVD 00082.
88. Pernyataan HRVD 02573 dan 04240. Lihat juga, Profil Komunitas CAVR, Desa Lebos-Gidapil, Subdistrik Lolotoe, Distrik Bobonaro, 9 September 2003.
89. Pernyataan HRVD 00561.
90. Pernyataan HRVD 00449; 00458 dan 00427.
91. Profil Komunitas CAVR, Desa Liurai, Subdistrik Turisca, Distrik Manufahi, 17 September 2003.
92. Pernyataan HRVD 02024; 02034; 08463; 06313; 06324 dan 05138. Lihat juga Profil Komunitas CAVR, Desa Faholulik, Subdistrik Tilomar, Distrik Covalima, 21 Oktober 2003.
93. Pernyataan HVRD 03510, 08385 dan Profil Komunitas CAVR, Desa Atara dan Salaun, Subdistrik Atsabe, Distrik Ermera, 14 April 2003
94. Pernyataan HRVD 09031 dari mantan pemimpin milisi, Belu, Timor Barat Indonesia 25 April 2003.
95. Lihat misalnya Pernyataan HRVD 00309.
96. Lihat misalnya Pernyataan HRVD 02950.
97. Lihat misalnya, Pernyataan HRVD 03685; 01239; 01208 dan 01239
98. Profil Komunitas CAVR, Desa Atara dan Salaun, Subdistrik Atsabe, Distrik Ermera, 14 April 2003
99. Pernyataan HRVD 02835
100. Profil Komunitas CAVR, Desa Costa, Subdistrik Pante Makasar, Distrik Oecussi, 16 Februari 2004.
101. Pernyataan HRVD 02632.
102. Pernyataan HRVD 02930.
103. Wawancara CAVR dengan Manuel Cárceres da Costa, UNHCR Repatriation/Protection Assistant, Dili, 25 November 2002.
104. Lihat Bank Dunia, Final Report of the Joint Assessment Mission to East Timor, 8 Desember 1999. Arsip CAVR.
105. Pernyataan HRVD 01101; 08303; 08312 dan 08314. Lihat juga Profil Komunitas CAVR: Desa Leimea Kraik dan Samara, Subdistrik Hatulia, Distrik Ermera, 20 Agustus 2003; Desa Ponilala, Poetete dan Mirtutu, Subdistrik Ermera, Distrik Ermera, 19-21 Januari 2004; Desa Lihu dan Railaco Kraik, Subdistrik Railaco, Distrik Ermera, 20 Februari 2003, Desa Lacro dan Paramin, Subdistrik Atsabe,

- Distrik Ermera, 26 Juni 2003; Desa Eraulo, Subdistrik Letefoho, Distrik Ermera, 2 Desember 2002; dan Desa Hatugau, Subdistrik Letefoho, Distrik Ermera, 14 Oktober 2002.
106. Pernyataan HRVD 05271 dan 08282.
 107. Pernyataan HRVD 04079.
 108. Pernyataan HRVD 07747; 07811; 03908 dan 07089. Lihat juga Profil Komunitas CAVR, Desa Gurusa, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 21 November 2003.
 109. Pernyataan HRVD 04194 dan 04129. Lihat juga Profil Komunitas CAVR: Desa Ahic, Dilor, Subdistrik Lacluta, Distrik Viqueque, 22 November 2002; Desa Luca, Subdistrik Viqueque, Distrik Viqueque, 10 Juni 2003; dan Desa Uaibobo, Subdistrik Ossu, Distrik Viqueque.
 110. Pernyataan HRVD 05173; 06351; 02046; 06263 dan 08560.
 111. Pernyataan HRVD 02807, 02828 dan 02630. Lihat juga Profil Komunitas CAVR, Desa Bobometo, Subdistrik Oesilo, Distrik Oecussi, 31 Mei 2003.
 112. Lihat misalnya, Pernyataan HRVD 02930, 00853 dan 00859; dan Profil Komunitas CAVR, Desa Usitaqeno, Subdistrik Oesilo, Distrik Oecussi, 24 Juli 2003; Desa Suni Ufe, Subdistrik Nitibe, Distrik Oecussi, 17 Januari 2003.
 113. Pernyataan HRVD 0831.
 114. Pernyataan HRVD 02418.
 115. Pernyataan HRVD 0140; 01391; 01392; 01307; 01312; 01334; 01335; 01381; 01382; 01392 dan 03310
 116. Lihat, misalnya, Profil Komunitas CAVR dari: Desa Asbilitoho, Desa Asbilitoho, Desa Asumano dan Desa Manukasa yang diambil di Subdistrik Liquidoe, Distrik Aileu, antara tanggal 11 Juli dan 3 September 2003.
 117. Artikel 4 Konvensi Jenewa III; Artikel 44 (1), (3) dan (4) Protokol Jenewa I. (Ini termasuk penempur yang sakit atau terluka: Artikel 14 Konvensi Jenewa I).
 118. Artikel 4A Konvensi Jenewa III.
 119. CAVR, Wawancara dengan Jacinto Alves, mantan asisten Kepala Staf Falintil, Dili, 3 Mei 2005.
 120. Artikel 5 Konvensi Jenewa III; Artikel 45 (1) Protokol Jenewa I.
 121. Artikel 4 Peraturan Den Hague; artikel 13 Konvensi Jenewa III.
 122. Artikel 13 dan 17 Konvensi Jenewa III
 123. Artikel 15, 26, 30 Konvensi Jenewa III.
 124. Artikel 19 dan 23 Konvensi Jenewa III.
 125. Artikel 5 Konvensi Jenewa IV
 126. Carmel Budiardjo & Kiem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Dokumen 8 Komando Distrik Militer XVI, Udayana, Prosedur Baku Interogasi Tahanan, PROTAP/01-B/VII/1982.
 127. Pernyataan HRVD 01440 dan 06571. Lihat juga Profil Komunitas CAVR, Desa Fatuloro, Subdistrik Fatululik, Distrik Covalima, 20 November 2002; Desa Tapo, Subdistrik Maliana, Distrik Bobonaro, 24 November 2003.
 128. Pernyataan HRVD 0485. Lihat juga Profil Komunitas CAVR, Desa Tapo, Subdistrik Maliana, Distrik Bobonaro, 24 November 2003.
 129. Profil Komunitas CAVR, Desa Lifau, Subdistrik Laleia, Distrik Manatuto, 17 Juni 2003
 130. CAVR, Wawancara dengan Zeferino Armada Ximenes (tanpa tanggal)
 131. Pernyataan HRVD 07331 dan 05069.
 132. Misalnya, Pernyataan HRVD 00716.
 133. Pernyataan HRVD 06515.
 134. Pernyataan HRVD 01267.
 135. Artikel 22 Peraturan Den Hague; Artikel 35 (1) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1986) Laporan ICJ paragraf 77.
 136. Deklarasi St Petersburg 1868; Artikel 23 Peraturan Den Hague; Artikel 35(2) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1986) Laporan ICJ paragraf 78.
 137. Artikel 51(4) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1986) Laporan ICJ paragraf 78.
 138. Lihat juga Artikel 54 (2) Protokol Jenewa I
 139. Lihat juga Artikel 54 (1) Protokol Jenewa I

140. Prosedur Operasional Resmi, No. PROTAP/3/IV/1988, Kemampuan Pesawat Taktis, 30 April 1988, Angkatan Bersenjata Indonesia, Komando Operasi Keamanan Timor Timur.
141. Prosedur Operasional Resmi, No. PROTAP/3/IV/1988, Kemampuan Amunisi dan Jarak Jangkauan, 30 April 1988, Angkatan Bersenjata Indonesia, Komando Operasi Keamanan Timor Timur.
142. Profil Komunitas CAVR, Desa Maneluma, Subdistrik Laulara, Distrik Aileu, 12 Desember 2002.
143. Profil Komunitas CAVR, Desa Lacló dan Paramin, Subdistrik Atsabe, Distrik Ermera, 16 Juni 2003.
144. Ibid
145. Profil Komunitas CAVR, Desa Atara dan Lasaun, Subdistrik Atsabe, Distrik Ermera, 14 April 2003
146. Profil Komunitas CAVR, Desa Guololo, Subdistrik Letefoho, Distrik Ermera, 25 November 2003
147. CAVR, Wawancara dengan Augusto Soares di Hatulia, Ermera, 13 Agustus 2003.
148. Ibid
149. Profil Komunitas CAVR, Desa Bora dan Manelima, Subdistrik Laclubar, Distrik Manatuto, 3 September 2003.
150. Profil Komunitas CAVR, Desa Kakae Uman, Subdistrik Natarbora/Barique, Distrik Manatuto, 11 April 2003.
151. Profil Komunitas CAVR, Desa Guruça, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 21 November 2003
152. Profil Komunitas CAVR di Desa Darulete, Subdistrik Liquiça, Distrik Liquiça 13 Februari 2003; Desa Leimena Kraik dan Samara, Subdistrik Hatulia, Distrik Ermera, 20 Agustus 2003; Desa Souro, Subdistrik Lospalos, Distrik Lautém 24 Februari 2004; Desa Lebos dan Guldapil, Subdistrik Lolotoe, Distrik Bobonaro 9 September 2003; Desa Fatuloro, Subdistrik Faululik, Distrik Covalima 21 November 2002; dan Desa Lifau, Subdistrik Laleia, Distrik Manatuto, 17 Juni 2003.
153. CAVR, Wawancara dengan Lucas da Costa Xavier, mantan tentara ABRI/TNI, Same Manufahi, 13 Agustus 2004.
154. Prosedur Operasional Resmi, No. PROTAP/3/IV/1988, Kemampuan Pesawat Taktis, 30 April 1988, Angkatan Bersenjata Indonesia, Komando Operasi Keamanan Timor Timur.
155. Conboy, hal. 276
156. Film dokumenter militer Indonesia, diperoleh Komisi dari sumber rahasia, Jakarta 2005. Arsip CAVR.
157. Protokol tentang Larangan dan Pembatasan pemakaian Senjata Pembakar 1980.
158. Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 21 September 2004.
159. Profil Komunitas CAVR, Desa Obulo dan Butamanu, Subdistrik Atsabe, Distrik Ermera, 13 Mei 2003.
160. Artikel 23 Peraturan Den Hague.
161. Artikel 51 Konvensi Jenewa IV.
162. Artikel 51 Konvensi Jenewa IV.
163. Pernyataan HRVD 02491.
164. Pernyataan HRVD 05720.
165. Pernyataan HRVD 03412.
166. Pernyataan HRVD 01105.
167. Pernyataan HRVD 04012.
168. Profil Komunitas CAVR, Desa Guruça, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 21 November 2003
169. Pernyataan HRVD 05685.
170. Lihat Pernyataan HRVD 07752, dan Profil Komunitas CAVR, Desa Mehara, Subdistrik Tutuala, Distrik Lautém, 27 November 2002.
171. Lihat misalnya Pernyataan HRVD 06081.
172. Lihat misalnya, Profil Komunitas CAVR di Desa Leber, Subdistrik Bobonaro, Distrik Bobonaro, 24 November 2003; Desa Guda, Subdistrik Lolotoe, Distrik Bobonaro, 26 Agustus 2003; Desa Leohito, Subdistrik Balibó, Distrik Bobonaro 21 Januari 2004; dan Desa Lourba, Subdistrik Bobonaro, Distrik Bobonaro 25 Januari 2003.
173. Pernyataan HRVD 08365.
174. Pernyataan HRVD 03403.
175. Lihat misalnya, Pernyataan HRVD 04763.
176. Profil Komunitas CAVR, Desa Defa-Uasi, Subdistrik Baguia, Distrik Baucau, 23 September 2003.
177. Pernyataan HRVD 03101.

178. Pernyataan HRVD 01071.
179. Profil Komunitas CAVR di Desa Bibileo, Subdistrik Viqueque, Distrik Viqueque, 5 Juni 2003; Desa Irabin de Baixo, Subdistrik Uatu Carbau, Distrik Viqueque, 26 Agustus 2003; Desa Assu da Cima, Subdistrik Ossu, Distrik Viqueque, 20 Maret 2003; dan Desa Manulesu, Subdistrik Liquidoe, Distrik Aileu, 27 Agustus 2003.
180. Pernyataan HRVD 03135.
181. Pernyataan HRVD 03093.
182. Pernyataan HRVD 03421.
183. Pernyataan HRVD 00168.
184. Pernyataan HRVD 01990.
185. Pernyataan HRVD 03963.
186. Pernyataan HRVD 03474.
187. Pernyataan HRVD 06044.
188. Pernyataan HRVD 04351.
189. Pernyataan HRVD 05687.
190. Instruksi – Operasi No. INSOP/03/II/1982
191. Lihat misalnya Profil Komunitas CAVR, Desa Asumano, Subdistrik Liquidoe, Distrik Aileu, 11 Juli 2003.
192. Instruksi – Operasi No. INSOP/03/II/1982, hal. 8
193. Conboy, hal. 298
194. Lihat Korps Marinir TNI AL, 1970-2000, Departemen Penerangan Marinir, Jakarta, 2000, hal. 274
195. Profil Komunitas CAVR, Desa Lelalai, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 20 Oktober 2003.
196. Profil Komunitas CAVR, Desa Muapetini, Subdistrik Lospalos, Distrik Lautém, 18 Februari 2004.
197. Profil Komunitas CAVR, Desa Rasa, Subdistrik Lospalos, Distrik Lautém, 1 Juli 2004.
198. Pernyataan HRVD 06057.
199. Pernyataan HRVD 05224.
200. Kepala Intelijen Mayor Willem Da Costa, Petunjuk Teknis Tentang kegiatan Babinsa, (Juknis /06/ IV/1982), 10 September 1982. Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, Zed Books, 1984, hal. 201.
201. Pernyataan HRVD 04107.
202. Pernyataan HRVD 05040.
203. Profil Komunitas CAVR, Desa Uaitame, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 12 Desember 2003.
204. Lihat misalnya, Profil Komunitas CAVR, Desa Fahisoi, Subdistrik Remexio, Distrik Aileu, 29 Mei 2003.
205. Pernyataan HRVD 03465.
206. Pernyataan HRVD 04071.
207. Pernyataan HRVD 01022.
208. Lihat misalnya Pernyataan HRVD 03252.
209. Pernyataan HRVD 04756.
210. Pernyataan HRVD 02283.
211. Profil Komunitas CAVR, Desa Mehara, Subdistrik Tutuala, Distrik Lautém, 21 November 2003.
212. Profil Komunitas CAVR, Desa Bibileo, Subdistrik Viqueque, Distrik Viqueque, 5 Juni 2003.
213. Profil Komunitas CAVR, Desa Uairoke, Subdistrik Luro, Distrik Lautém, 7 Oktober 2003; Desa Mehara, Subdistrik Tutuala, Distrik Lautém, 11 November 2002.
214. Profil Komunitas CAVR, Desa Mehara, Subdistrik Tutuala, Distrik Lautém, 27 November 2002
215. Pernyataan HRVD 05317; 05365 dan 05389.
216. Pernyataan HRVD 04129.
217. Pernyataan HRVD 00155.
218. Pernyataan HRVD 05316.
219. Pernyataan HRVD 04439.
220. Lihat misalnya Pernyataan HRVD 04251 dan 06817.
221. Pernyataan HRVD 01429 dan 07696.

222. Pernyataan HRVD 04386.
223. Profil Komunitas CAVR, Desa Guruça, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 21 November 2003.
224. Pernyataan HRVD 01036.
225. Pernyataan HRVD 05825 dan 01313.
226. Pernyataan HRVD 04793 dan 01752.
227. Pernyataan HRVD 03078.
228. Pernyataan HRVD 07665.
229. Profil Komunitas CAVR, Desa Bualale, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 16 Desember 2003.
230. Profil Komunitas CAVR, Desa Namalesu, Subdistrik Liquidoe, Distrik Aileu, 27 Agustus 2003
231. Lihat misalnya Pernyataan HRVD 00638 dan 00427.
232. Lihat misalnya, Profil Komunitas CAVR, Desa Uaimori, Tula, Subdistrik Viqueque, Distrik Viqueque, 19 Juni 2003.
233. Profil Komunitas CAVR, Desa Bibileo, Subdistrik Viqueque, Distrik Viqueque, 5 Juni 2003.
234. Pernyataan HRVD 06483.
235. Pernyataan HRVD 03408 dan 04748.
236. Pernyataan HRVD 06293; 00762 dan 01425.
237. Pernyataan HRVD 02934; 018958 dan 00243.
238. António Serpa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
239. CAVR, Wawancara dengan Humberto Martins da Cruz (tanpa tanggal)
240. Ibid; lihat juga pernyataan HRVD 09081.
241. Francisco Guterres "Lú-Olo", kesaksian dalam kapasitasnya sebagai Presiden Fretilin, dan kesaksian Mari Alkatiri dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Fretilin, pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
242. Francisco Xavier do Amaral, Ibid
243. Angelo Araújo, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, 19-21 November 2003.
244. CAVR, Wawancara dengan Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak, Dili, 9 Juni 2004
245. CAVR, Wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004
246. CAVR, Wawancara dengan Agostinho Boavida Ximenes (Sera Malik), Soe, Timor Barat, Indonesia, 28 Agustus 2004.
247. CAVR, Wawancara dengan José da Conceição, Kupang, Timor Barat, Indonesia, 24 Agustus 2004.
248. Profil Komunitas CAVR, Desa Faturasa, Subdistrik Remexio, Distrik Aileu, 20 Juni 2003.
249. CAVR, Wawancara dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
250. Profil Komunitas CAVR, Desa Fahisoi, Subdistrik Remexio, Distrik Aileu, 29 Mei 2003.
251. Profil Komunitas CAVR, Desa Guruça, Subdistrik Quelicai, Distrik Baucau, 21 November 2003
252. CAVR, Wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
253. Xanana Gusmão, *Timor-Leste: Um Povo Uma Pátria*, Edições Colibri, 1994, hal. 31.
254. Ibid.
255. Lihat misalnya Pernyataan HRVD 04149.
256. Pernyataan HRVD 07612.
257. Lihat Profil Komunitas CAVR dari subdistrik-subdistrik tersebut. Arsip CAVR.



Foto dari arsip CAVR

Chega!

Bagian 7
Bab 7.6.

Pengadilan politik

Bab 7.6. Pengadilan politik

.....
1981 | Pendahuluan

.....
1983 | Kerangka hukum

1984 | Hukum Indonesia

1984 | Hukum kemanusiaan internasional

1985 | Standar-standar hak asasi manusia internasional

1986 | Kerangka analitis

.....
1986 | Gelombang pertama pengadilan politik: 1983-85

1986 | Latar belakang

1989 | Proses hukum formal

1990 | Memberi tahu tersangka akan hak-hak dasar mereka

1992 | Penyiksaan dan penganiayaan dalam tahanan

1994 | Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

1996 | Sidang pengadilan

1996 | Dakwaan

2000 | Kondisi ruang persidangan

2000 | Keterangan saksi

2002 | Hak untuk memilih penasihat hukum dan untuk pembelaan yang efektif

2006 | Praduga tak bersalah

2007 | Kemandirian dan ketidakberpihakan pengadilan

2008 | Hak naik banding

2009 | Kesimpulan

.....
2011 | Pengadilan Santa Cruz: 1992

2012 | Ulasan fakta

2012 | Latar belakang

2012 | Temuan fakta sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan selama sidang

2013 | Fakta-fakta berdasarkan sumber-sumber independen

2014 | Penangkapan

2015 | Prasadang

2015 | Kondisi di Polda Comoro

2017 | Investigasi

2017 | Pencarian informasi

2018 | Cara-cara tidak sah dalam mendapatkan pengakuan

2019 | Pemalsuan barang bukti

2020 | Akses terhadap pengacara

2023 | Persidangan

2023 | Dakwaan

2023 | Kondisi ruang sidang

2024 | Saksi

2026 | Bukti

2027 | Jaksa

2028 | Pembela

2032 | Hakim

2034 | Putusan

2036 | Banding

2037 | Pemenjaraan

2037 | Pengadilan dan penghukuman anggota pasukan keamanan Indonesia yang terlibat dalam Pembantaian Santa Cruz

2037 | Kesimpulan

2042 | Pengadilan Jakarta 1992

2043 | Penangkapan

2043 | Penangkapan di Jakarta

2045 | Penangkapan di Denpasar, Bali

2046 | Penahanan prasidang

2047 | Kondisi penahanan di Jakarta

2048 | Kondisi penahanan di Denpasar, Bali

2049 | Akses kepada bantuan hukum

2050 | Investigasi

2051 | Persidangan

2051 | Dakwaan

2051 | **Dakwaan terhadap João Freitas da Câmara**

2052 | **Dakwaan terhadap Fernando de Araújo**

2053 | Kondisi ruang sidang

2054 | Saksi

2054 | Bukti

2055 | Kinerja pengacara

2056 | Isi pembelaan

2056 | **Putusan dan vonis**

2056 | Banding

2058 | Kesimpulan

.....
2059 | Pengadilan Xanana Gusmão

- 2060** | Prasadang
 - 2060** | Penangkapan
 - 2061** | Penahanan prasadang
 - 2064** | Investigasi
 - 2065** | Akses terhadap pengacara
- 2068** | Persidangan
 - 2068** | Surat dakwaan
 - 2069** | Kondisi ruang sidang
 - 2071** | Bahasa
 - 2071** | Panel saksi
 - 2074** | Kinerja kuasa hukum
 - 2077** | Pleidoi Xanana Gusmão
 - 2079** | Para hakim
- 2080** | Pengajuan grasi
- 2082** | Peninjauan kembali
- 2082** | Vonis
- 2083** | Kesimpulan

.....
2084 | Pengadilan Mahkota, 1997

- 2085** | Penangkapan
- 2087** | Prasadang
- 2089** | Akses untuk pengacara
- 2090** | Investigasi
- 2092** | Sidang pengadilan
 - 2092** | Dakwaan
 - 2093** | Keterbukaan sidang pengadilan
 - 2093** | Saksi
 - 2094** | Bukti-bukti
 - 2095** | Kinerja para pengacara
 - 2096** | Pembelaan
 - 2097** | Kinerja para hakim
 - 2098** | Keputusan dan vonis
- 2099** | Banding
- 2100** | Kesimpulan

.....
2101 | Temuan

Pengadilan Politik

7.6.

Pendahuluan

1. Bab ini membahas tentang pengadilan politik terhadap para tahanan orang-orang Timor atas tuduhan kejahatan politik oleh pemerintah Indonesia selama periode pendudukan Indonesia di Timor-Leste. Namun demikian, Komisi juga mengakui bahwa Fretilin pun melakukan pengadilan terhadap orang-orang atas tuduhan kejahatan politik, termasuk pengkhianatan, selama masa pemerintahannya dalam akhir tahun 1970-an. Pengadilan oleh Fretilin ini dibahas dalam Bagian 4: Rezim pendudukan, dan Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan, bagian tentang Fretilin, 1976-79.

2. Meskipun kasus pidana sudah mulai ditangani pengadilan Indonesia di Timor-Leste sejak 1977,^{*} undang-undang pidana belum pernah digunakan untuk mengadili para lawan politik yang menentang integrasi Timor-Leste ke Indonesia pada awal tahun-tahun pendudukan tersebut. Para tahanan politik dalam periode ini bukannya diajukan ke pengadilan, melainkan dengan sewenang-wenang ditahan dalam waktu tidak terbatas atau bahkan dibunuh. Pada 1983, sebagai tindak lanjut kebijakan baru 'normalisasi', pemerintah Indonesia membuat keputusan bahwa orang-orang yang dicurigai mendukung gerakan kemerdekaan dapat didakwa melakukan perbuatan makar dan subversi, dan dituntut di pengadilan. Ratusan orang Timor-Leste telah diadili dan diputus bersalah melakukan berbagai pelanggaran ini selama enam belas tahun berikut.

3. Komisi telah membaca dan mempelajari isi ratusan berkas Pengadilan Negeri Dili yang berkenaan dengan pengadilan-pengadilan ini. Selain itu, Komisi juga telah mewawancarai dan menerima pernyataan banyak individu yang pernah menjadi

^{*} Sudah sejak 24 Juli 1976, Komandan Kodahankam Kol. Dading Kalbuadi mengeluarkan surat perintah penahanan Tito Dos Santos Baptista (22) atas pelanggaran pasal 359 KUHP berkenaan dengan kecelakaan mobil fatal [Wawancara dengan Mário Carrascalão, 30 Juni 30 2004].

terdakwa dalam pengadilan, saksi kejadian, dan pengacara, baik orang Timor-Leste maupun orang Indonesia, yang pernah terlibat dalam kasus-kasus tersebut.

4. Gambaran yang muncul dari penyelidikan-penyelidikan ini ialah bahwa pengadilan-pengadilan tersebut tidak mengurangi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, melainkan hanya sedikit mengubah bentuk pelanggaran tersebut. Pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan lawan politik terus berlanjut. Di samping itu sejumlah pelaku, termasuk agen intelijen militer, polisi, jaksa, pengacara, dan hakim, terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran lain yang berkaitan dengan pelaksanaan “pengadilan sandiwara” yang bersifat politis tersebut.

5. Pengadilan-pengadilan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa perubahan kebijakan telah menghasilkan komitmen baru kepada hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pada kenyataannya, pengadilan-pengadilan tersebut merupakan rekayasa canggih yang dirancang untuk menghasilkan ilusi tentang keadilan dan jalannya proses yang adil. Tabir ini menyembunyikan kenyataan bahwa pengadilan adalah sekadar sarana untuk memastikan penghukuman bagi lawan-lawan politik sembari menanggapi kritik internasional.

6. Pengadilan-pengadilan tersebut melakukan sederetan pelanggaran atas hukum pidana Indonesia dan hukum internasional. Para terdakwa sering disiksa dan diintimidasi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang berisi pengakuan dan bukti yang melawan terdakwa yang lain. Berita Acara Pemeriksaan ini menjadi dasar bagi banyak hukuman yang dijatuhkan. Petugas militer dan polisi Indonesia sering memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah di pengadilan, dan mengintimidasi para saksi yang lain untuk melakukan hal yang sama atau untuk tidak memberikan kesaksian samasekali. Para terdakwa diingkari haknya untuk memilih penasihat hukum mereka sendiri, dan dalam sebagian besar kasus mereka mendapat pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan demi memperlancar tuntutan jaksa. Para hakim mengabaikan indikasi adanya perilaku tidak etis dan bukti yang direkayasa, serta menjatuhkan putusan bersalah dalam semua kasus. Hukuman yang dijatuhkan sangat kejam dan dalam banyak kasus tidak memperhitungkan lamanya waktu yang dihabiskan para terdakwa di tempat penahanan militer. Komisi tidak menemukan satu pun terdakwa yang divonis bebas dalam ratusan berkas perkara yang dipelajari. Proses banding hanyalah merupakan pemberian cap stempel dari otoritas yang lebih tinggi atas putusan pengadilan yang cacat.

7. Karena banyaknya pengadilan politik yang dilaksanakan, Komisi tidak mampu melaporkan secara mendalam semua pelanggaran. Oleh sebab itu, dalam bab ini Komisi memuat analisis terhadap pengadilan-pengadilan politik terpenting yang dilakukan selama masa pendudukan Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang tampak dalam pelaksanaan pengadilan-pengadilan ini secara umum sesuai dengan pola-pola yang ditemukan dalam pengadilan lain yang dipelajari oleh Komisi.

8. Bab ini dimulai dengan survei atas gelombang pertama pengadilan politik dari 1983 hingga 1985, kemudian memberikan analisis khusus terhadap empat

pengadilan terpenting, yaitu pengadilan terhadap pengorganisasi demonstrasi Santa Cruz pada 1992; pengadilan terhadap pengorganisasi demonstrasi Jakarta pada 1992; pengadilan Xanana Gusmão pada 1993; serta pengadilan terhadap pengorganisasi dan peserta demonstrasi Hotel Mahkota pada 1997.

Kerangka hukum

9. Seperti yang sudah dibahas secara seksama dalam Bagian Mandat Laporan ini, integrasi Timor-Leste ke Indonesia tidak sah berdasarkan hukum internasional. Indonesia adalah negara penguasa pendudukan atas Timor-Leste.

10. Konvensi Jenewa IV menyatakan bahwa hukum pidana yang berlaku di suatu wilayah pada saat sebelum menjadi wilayah pendudukan harus “tetap berlaku, kecuali jika hukum tersebut dibatalkan atau ditangguhkan oleh Negara Pendudukan untuk kasus-kasus di mana hukum tersebut merupakan ancaman terhadap keamanannya atau menjadi penghalang berlakunya Konvensi ini.”¹

11. Penduduk sipil di daerah pendudukan dapat diadili atas tuduhan tindak kejahatan yang sengaja untuk merongrong penguasa pendudukan.² Namun demikian, hukum tentang konflik bersenjata menyatakan dengan tegas bahwa penduduk sipil di daerah pendudukan tidak boleh dituntut untuk bersumpah setia terhadap penguasa pendudukan. Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh menindas atau menghukum penduduk Timor-Leste karena melakukan perlawanan politik terhadap pendudukan, termasuk karena kejahatan subversi atau makar.

12. Terlepas dari hal seperti di atas, Komisi mengakui bahwa selama periode terkait secara *de facto* pemerintah Indonesia memberlakukan hukum Indonesia seutuhnya di wilayah Timor-Leste, yang dianggap sebagai Provinsi Timor Timur. Namun Komisi berpendapat, Indonesia bukan hanya tidak memiliki hak untuk mengadili individu-individu dengan alasan oposisi politik, tetapi lebih daripada itu cara pengadilan yang dijalankan terhadap lawan-lawan politik itu pun melanggar banyak ketentuan yang berlaku dalam hukum Indonesia sendiri dan hukum internasional.

13. Bagian ini membahas sejauh mana pengadilan-pengadilan terhadap lawan-lawan politik Timor-Leste selama masa pendudukan tersebut telah melanggar hukum Indonesia dan/atau standar hukum internasional tentang ‘pengadilan yang adil’. Pembahasan ini termasuk perihal pelanggaran-pelanggaran khusus terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), kewajiban-kewajiban yang mengikat Indonesia

¹ Pasal 45 Regulasi Tambahan ke Konvensi Den Haag IV (tidak memaksa penduduk yang wilayahnya diduduki untuk bersumpah setia); Konvensi Jenewa III, Pasal 87 (dalam menjatuhkan hukuman kepada tawanan perang, pengadilan atau otoritas harus mempertimbangkan, sejauh yang memungkinkan, bahwa terdakwa bukan warga negara yang menduduki dan tidak berkewajiban bersumpah setia).

menurut Konvensi Jenewa IV, hukum kebiasaan internasional, dan pelanggaran atas standar hak asasi internasional seperti yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP; International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR)

Hukum Indonesia

14. Sebagian besar terdakwa kasus politik dikenai dakwaan melakukan makar³ atau berdasarkan Undang-Undang Anti-Subversi 11/1963 dengan dakwaan menggulingkan, menghancurkan, atau merongrong kekuasaan atau otoritas negara. “Makar” didefinisikan sebagai “usaha yang dilakukan dengan tujuan menjadikan seluruh atau sebagian wilayah negara ada di bawah dominasi asing, atau memisahkan diri daripadanya.”

15. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur semua proses peradilan pidana di Indonesia. Meskipun tidak memberi jaminan yang menyeluruh untuk peradilan yang adil, KUHAP memuat ketentuan-ketentuan penting yang melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, yakni:

- Akses kepada pengacara independen (Pasal 54, 55), keluarga (Pasal 60, 61), dan dokter (Pasal 58) dalam masa prasidang
- Hak untuk tidak memberikan kesaksian (Pasal 66)
- Hak untuk pengadilan terbuka (Pasal 64, 153)
- Hak untuk memanggil saksi (Pasal 65) dan mengajukan pembelaan (Pasal 182 1b)
- Hak terdakwa dan saksi untuk bebas dari intimidasi (Pasal 117)
- Hak untuk banding (Pasal 67)

Hukum kemanusiaan internasional

16. Karena status hukum Indonesia sebagai negara pendudukan, berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, terdapat sejumlah kewajiban yang mengikat Indonesia secara hukum sehubungan dengan jaminan adanya peradilan yang adil. Sebagai negara peserta Konvensi Jenewa IV sejak 1958, Indonesia terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berikut, di antaranya:

- Pasal 67: “Pengadilan hanya dapat menerapkan pasal-pasal hukum yang sesuai dengan pelanggaran, dan berkaitan dengan prinsip-prinsip umum hukum, khususnya prinsip yang menyatakan bahwa vonis harus sesuai dengan pelanggaran. Pengadilan harus mempertimbangkan fakta bahwa terduduk bukanlah warganegara Pemerintah Pendudukan.

* Pasal 1(1)b Undang-Undang Anti-Subversi 11/1963: Merupakan pelanggaran yang bisa dihukum, yaitu menjatuhkan, menghancurkan, atau merongrong kekuasaan negara atau otoritas negara atau otoritas pemerintah yang sah atau perangkat negara.

- Pasal 71: “Tidak ada hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang kompeten dari Pemerintah Pendudukan, kecuali sesudah melalui sidang peradilan yang wajar. Terduduh yang dituntut Pemerintah Pendudukan harus segera diberitahu secara tertulis, dalam bahasa yang mereka pahami, tentang hal-hal mengenai dakwaan yang didakwakan kepada mereka, dan harus segera dibawa ke pengadilan secepat mungkin.”
- Pasal 72: “Terduduh harus punya hak untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk pembelaan mereka, khususnya memanggil saksi-saksi. Mereka harus memiliki hak untuk didampingi pengacara atau penasihat hukum yang memenuhi syarat atas pilihan mereka sendiri, yang harus dapat mengunjungi mereka secara bebas dan mendapat kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk mempersiapkan pembelaan mereka”

Standar-standar hak asasi manusia internasional

17. Standar-standar minimal untuk hak atas peradilan yang adil dipaparkan dalam Pasal 14 dan 15 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Jaminan-jaminan yang relevan dapat disarikan sebagai berikut:

- Hak untuk segera diberitahu tentang sifat dan alasan tuduhan. Informasi tersebut harus membuat tertuduh paham mengenai apa yang dituduhkan, sehingga ia dapat menyiapkan pembelaan.
- Hak untuk memperoleh waktu dan kemudahan yang cukup untuk menyiapkan pembelaan, dan hak untuk berhubungan dengan penasihat hukum yang dipilih oleh tertuduh. Hal ini meliputi akses untuk dokumen-dokumen yang relevan, dan berwenang untuk berhubungan secara bebas dan rahasia dengan pengacara.
- Praduga tak bersalah. Ini berarti bahwa tertuduh dianggap tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah. Beban untuk membuktikan pelanggaran ada pada jaksa.
- Hak untuk persidangan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak.
- Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak perlu.
- Hak untuk diadili dalam kehadiran.
- Hak untuk melakukan pembelaan sendiri atau melalui pengacara yang dipilih sendiri. Terduduh tidak dapat dibatasi dalam memilih pembelaan yang ada yang diakui oleh hukum.
- Hak memperoleh bantuan hukum yang disediakan oleh Negara, apabila tertuduh tidak mampu membayar pengacara.
- Hak untuk memeriksa saksi-saksi.
- Hak untuk memperoleh pendampingan bebas biaya dari seorang penerjemah, apabila tertuduh tidak memahami atau tidak menggunakan bahasa yang dipakai di pengadilan.

- Hak untuk tidak bersaksi melawan diri sendiri atau yang memberatkan diri sendiri.
- Hak untuk tidak diadili atas sesuatu yang bukan merupakan tindak pidana pada saat tindakan tersebut dilakukan.
- Hak untuk tidak diadili atas sesuatu yang sebelumnya telah membuat tertuduh diajukan ke pengadilan.

Kerangka analitis

18. Berdasarkan hukum Indonesia, hukum kemanusiaan internasional, dan hukum kebiasaan internasional, Indonesia berkewajiban memberi jaminan peradilan yang adil atas mereka yang didakwa melakukan pelanggaran pidana di wilayah pendudukan Timor-Leste. Analisis berikut membicarakan lima masa penting selama pendudukan, yaitu gelombang pertama pengadilan politik pada 1983-1985; pengadilan Santa Cruz pada awal 1990-an; pengadilan Jakarta; pengadilan Xanana Gusmão; dan pengadilan Hotel Mahkota. Analisis ini menggunakan jaminan prosedural seperti yang dipaparkan di atas, untuk memutuskan sejauh mana pengadilan-pengadilan dalam lima situasi tersebut memenuhi kewajiban Indonesia berdasarkan hukum domestik dan hukum internasional.

Gelombang pertama pengadilan politik: 1983-1985

Latar belakang

19. Sistem peradilan sipil Indonesia mulai berjalan di Timor-Leste setidaknya sejak 1977.⁴ Akan tetapi, pengadilan resmi terhadap para pendukung Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente) dan lain-lain yang berhubungan dengan gerakan kemerdekaan, baru dimulai pada 1983.⁵ Dalam periode antara 1983-85 terjadi peningkatan ‘pengadilan politik’ terhadap para individu yang dikenai dakwaan makar, subversi, dan pelanggaran-pelanggaran serupa yang lain.

20. Empat pengadilan pertama atas para individu yang dituduh dengan dasar keanggotaan “GPK[†]/Fretilin” terjadi pada Desember 1983. Dalam suratnya kepada Amnesty International tanggal 30 April 1984, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menyebutkan bahwa terdapat 200 pengadilan lagi yang sudah direncanakan. Sampai akhir 1985 setidaknya sudah dijatuhkan 232 putusan terkait pengadilan

* Beberapa laporan menyatakan adanya pemeriksaan-pemeriksaan informal yang dilakukan di tempat-tempat penahanan seperti Sang Tai Hoo.

† Singkatan dari ‘Gerombolan Pengacau Keamanan’; penamaan Orde Baru terhadap gerakan perlawanan di Aceh, Papua, dan Timor-Leste.

politik—semuanya adalah putusan bersalah.^{*} Pada 1986, 70 orang lagi diadili. Sampai 1987, jumlah pengadilan politik yang diselenggarakan sudah sangat menurun. Sebaliknya, jumlah pengadilan bagi pelanggaran pidana biasa tetap konstan selama masa ini.[†]

21. Langkah menuju pengadilan formal terhadap para tersangka makar atau pelanggaran serupa lainnya menunjukkan pergeseran kebijakan pada pihak penguasa Indonesia. Kebijakan ini menambahkan kepada metode-metode yang sudah ada penggunaan sistem peradilan formal untuk menumpas gerakan prokemerdekaan.

22. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa kebijakan tersebut mengurangi praktik-praktik terdahulu yang menerapkan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum terhadap para aktivis prokemerdekaan. Analisis dari pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan kepada Komisi memperkuat dugaan bahwa praktik-praktik ini terus berlangsung setelah ada kebijakan untuk juga menggunakan sistem peradilan formal. (lihat Profil pelanggaran Hak Asasi Manusia; Bagian 6; dan Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan, Bab 7.4)

23. Banyak tertuduh dalam berbagai kasus memang menyaksikan bahwa banyak orang yang ditahan bersama mereka telah dibunuh, hilang, atau mati di tahanan sebagai akibat penganiayaan. Dalam beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan, banyak tawanan yang dituduh telah berkonspirasi dengan tertuduh yang tidak bisa dihadirkan sebagai saksi karena mereka telah dibunuh atau telah hilang.[‡] Nasib mereka itu tidak pernah disebut-sebut di pengadilan, tetapi tidak bisa tidak selalu menghantui pikiran para tertuduh setiap mereka di persidangan.

.....
* Seorang bekas tawanan menceritakan bahwa Balide, tempat sebagian besar tawanan politik ditahan, sepanjang 1983 penuh dengan sekitar 200 tawanan. Wawancara dengan David da Conceição (Aleon), Proyek Video Comarca oleh Neil Barret, Submisi kepada CAVR, Agustus 2002; Caetano Gutierrez memperkirakan ada sekitar 300 orang tawanan [lihat Wawancara CAVR dengan Caetano Gutierrez, Dili, 22 Mei 2004, hal. 5].

† Menurut Hakim Siregar “pengadilan GPK” dimulai pada 1983 dengan lima orang terdakwa, bertambah menjadi 82 pada 1984, dan 69 pada 1985 sampai 13 Agustus 1985. Pada Juni 1985, pemerintah mengeluarkan daftar 154 orang mulai dari Desember 1983 sampai Maret 1985, yang belakangan direvisi menjadi 157. Daftar kedua pemerintah yang diperoleh Amnesty International, tertanggal 28 Mei 1985, mencatat 31 berkas perkara yang diajukan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Daftar ketiga tertanggal 23 Juli 1985 menyebut adanya delapan nama yang diadili pada Juli (termasuk seorang yang tercantum dalam daftar terdahulu). Jika semua daftar ini disatukan, ternyata ada sebanyak 185 orang Timor-Leste yang telah diadili atas tuduhan politik sampai dengan Juli 1985. Amnesty International, *Unfair trials and possible torture in East Timor*, Desember 1985.

‡ Sebagai contoh, misalnya, dalam perkara David Ximenes, dua orang yang dituduh ikut dalam rapat-rapat dengan tertuduh Joao Christorei dan Danilo da Silva, keduanya hilang, bersama dengan banyak tahanan lainnya, sesudah mereka ditahan setelah peristiwa penyerangan Marabia pada 10 Juni 1980. Dalam kasus Ze Roberto Seixas Miranda Jeronimo, empat orang yang dituduh ikut rapat dengan tertuduh Francisco Serpa Rosa, Manuel Jeronimo, Manuel da Costa, dan Filomeno da Gama dilaporkan telah dibunuh atau hilang pada saat, atau sekitar saat, penahanan Ze Roberto Seixa pada November 1983. Beberapa tertuduh, termasuk Aitahan Matak, Henrique Belmiro, Fernando da Costa, dan Rogerio Pinto, merupakan bagian dari kelompok 69 orang tahanan yang ditahan pada Agustus 1983, dan tidak lama kemudian dibawa ke penjara Penfui di Kupang. Hanya 14 dari 69 orang itu berhasil selamat melewati tahun-tahun penahanan mereka di Kupang. Sisanya hilang atau mati akibat kondisi penahanan yang sangat buruk. Tentang semua kasus ini lebih lanjut, lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.

24. Pergeseran kebijakan ini juga tidak menciptakan situasi di mana tokoh-tokoh prokemerdekaan akan diadili secara adil untuk tuduhan-tuduhan yang berkenaan dengan aktivitas mereka. Yang terjadi justru adanya pengadilan kilat terhadap sebagian orang-orang yang ditahan karena kegiatan-kegiatan prokemerdekaan itu. Dan pengadilan-pengadilan ini dimanipulasi untuk memastikan bahwa putusan-putusan yang dijatuhkan ialah putusan-putusan bersalah karena perbuatan makar dan subversi.

25. Putusan bersalah atas para terdakwa dipastikan dengan menggunakan penyiksaan fisik dan perampasan waktu tidur selama interogasi, intimidasi terhadap para saksi yang dapat bersaksi untuk meringankan terdakwa, pemalsuan bukti, kolusi, dan pemalsuan keterangan para saksi penuntutan, tidak memberi izin terdakwa memilih pengacara yang akan membela mereka, dan manipulasi proses persidangan.

26. Dengan demikian, pengadilan-pengadilan ini memberikan kepada pemerintah Indonesia sebuah jawaban yang dangkal terhadap kritik internasional yang terus meningkat sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste. Pengadilan-pengadilan tersebut memberi dasar untuk mengatakan bahwa program untuk menekan gerakan prokemerdekaan tidak lagi didasarkan atas pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hak orang-orang yang dicurigai atas kegiatan prokemerdekaan. Namun, pada kenyataannya, hanyalah bentuk dari beberapa pelanggaran itu yang berubah. Penggunaan siksaan, pemenjaraan sewenang-wenang, dan pembunuhan yang sistematis terus berlanjut bersamaan dengan diadilinya para lawan politik melalui proses yang tidak adil dan melanggar banyak hak-hak dasar mereka.

27. Dapat diduga bahwa pelanggaran atas hak-hak sementara orang yang dicurigai terlibat dalam kegiatan prokemerdekaan akan lebih parah jika tidak ada pergeseran kebijakan untuk juga menggunakan pengadilan sebagai alat dalam program ini. Penahanan-penahanan, interogasi, proses pengadilan yang tidak adil, dan pemenjaraan bisa saja dikatakan sebagai perbaikan dari praktik-praktik sebelumnya yang dilakukan hampir samasekali "dalam kegelapan". Setidaknya, pengadilan-pengadilan ini bersifat terbuka, mungkin melibatkan lebih sedikit kekerasan, dan para terdakwanya berkemungkinan lebih kecil untuk dibunuh atau dihilangkan setelah dilangsungkannya pengadilan terbuka itu. Namun, hal ini tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa pengadilan-pengadilan itu sendiri, dan masa penahanannya sebagai kelanjutan yang tidak terelakkan, melibatkan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hak-hak semua tersangka yang diadili.

28. Pengadilan-pengadilan tersebut sesungguhnya hanyalah sandiwara belaka, yang memberi ilusi bahwa sekarang telah terjadi perubahan kebijakan yang lebih menghormati hak-hak asasi manusia. Ilusi ini, sedikitnya, telah mengalihkan perhatian dari pelanggaran-pelanggaran yang masih terus terjadi.

29. Pada 1985, Amnesty International mencatat:

Pada 1984 dan 1985, Pemerintah Indonesia menunjuk pada pengadilan atas tahanan politik di Dili, Timor Timur, sebagai bukti bahwa kondisi hak asasi manusia di wilayah itu telah membaik...Berita-berita pers

mengutip pejabat Indonesia yang menyatakan bahwa semua tahanan telah diadili atau telah dijadwalkan untuk diadili.⁵

30. Usaha-usaha Indonesia ini sedikit banyak mampu menjadi sarana yang efektif untuk mendapat dukungan internasional, apalagi para pengamat internasional tidak dapat memantau langsung proses persidangan dan kondisi penahanan para tersangka. Pada 1984, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menulis:

Banyak warga Timor-Leste yang ditahan pada tahun-tahun lalu telah diadili dalam pengadilan sipil tahun ini. Tujuh puluh orang yang diwakili oleh pengacara sipil yang ditunjuk pemerintah dan didakwa atas pelanggaran Hukum Pidana, telah terbukti bersalah dan dihukum antara satu sampai delapan belas tahun penjara.⁶

31. Setelah mempelajari lebih daripada 200 berkas pengadilan dan mewawancarai banyak orang yang pernah diadili dan yang terlibat dalam proses peradilan, Komisi mendapat gambaran yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi sehubungan dengan pengadilan-pengadilan politik.

Proses hukum formal

32. Dokumen-dokumen yang dipelajari oleh Komisi menunjukkan adanya sebuah perubahan kebijakan penting pada September 1983, yang digagas oleh militer Indonesia. Diperintahkan agar kasus-kasus yang sebelumnya ada di bawah penguasa militer dilimpahkan kepada Komandan Resor Kepolisian setempat untuk diproses sebagai kasus pidana di pengadilan.^{*} Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat legitimasi keberadaan Indonesia dengan memberi kesan normal dan berlakunya supremasi hukum.

33. Sementara perubahan kebijakan ini berarti bahwa tanggung jawab dilimpahkan ke pihak kepolisian, jaksa, dan hakim, peran aktif terus dimainkan di belakang panggung oleh tokoh-tokoh militer penting.⁷

34. Dokumen-dokumen dalam berkas perkara yang dipelajari Komisi menunjukkan bahwa pada 1984, Satuan Tugas Khusus Kepolisian dibentuk untuk menangani

* Dokumen TR/130/1983 tertanggal 26 September 1983, dengan menggunakan TTK untuk titik dan KMA untuk koma, dokumen tersebut tertulis sbb: "Aaa ttk ref Banyaknya kasus kriminalitas yang penanganan awalnya dilakukan oleh para Dandim ttk [.] Bbb ttk Diperintahkan kepada tsb alamat agar segera melimpahkan kasus2 tersebut kepada masing2 Dan res kma agar dapat segera diproses perkaranya ttk" Dokumen ini dikirimkan oleh Komandan Korem 164/Wira Darma kepada para Komandan Kodim 1627 sampai 1639 dengan tembusan kepada Pangdam XVI/Udayana, Komandan Kolakops, Komandan Wilayah 11.3 Tim-Tim (polisi), Wakil Panglima Komando Taktis Pelaksana Khusus Daerah Nusa Tenggara (Wapa Kotis Laksusda Nusra), Kepala Seksi 1, 3, dan 5 Korem 164/Wira Darma. Dokumen ini terdapat dalam beberapa berkas, termasuk berkas David Dias Ximenes No. 22/Pid/B/84/PN.DIL. Juga ada rujukan-rujukan dalam berkas untuk "TR dan Kolakops No:TR/661/IX/1983 tertanggal 28 September 1983 tentang pelimpahan tahanan untuk diselesaikan menurut prosedur Hukum yang berlaku", yang agaknya merupakan pelaksanaan peraturan yang berlaku.

penyelidikan-penyelidikan ini.⁸ Tim ini tampaknya menggantikan Satuan Tugas sebelumnya, yakni Satgas KOWIL (Komando Wilayah) 11.3 Timor Timur dan Tim Pemeriksa Kolakops (Komando Pelaksana Operasi) Timor Timur. Pada 21 Februari 1984, Kepala Kepolisian Wilayah Timor Timur (Drs. Soenardjadi) mengeluarkan Perintah Pelaksanaan (NO. POL: PRINLAK/69/II/1984/POLWIL TIMS); “Demi untuk kepentingan pelaksanaan tugas pada Kepolisian Wilayah Timor Timur dalam rangka pendayagunaan tenaga Task Force dari POLDA Nusra maka dipandang perlu mengeluarkan Perintah Pelaksanaan sebagai berikut”⁹

35. Dalam tiga bulan sejak perintah ini dikeluarkan, setidaknya lima belas orang telah diserahkan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum.¹⁰ Komisi mempelajari dokumen yang dialamatkan kepada DAN RES 11.31/DILI dari Komandan Distrik Militer Dili Letkol Rohiat Wiseso. Dokumen ini menyebut penyerahan 15 orang tersangka. Serah terima yang lain semacam ini juga terjadi pada 21 Februari 1984. Komandan Pelaksana Operasi Timor Timur (Kol. Inf. Rudito dalam kapasitasnya sebagai Komandan Kolakops) menyerahkan tujuh orang tahanan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum. Jelas bahwa kasus-kasus ini adalah yang dianggap sudah ‘siap’ untuk diproses, dan samasekali tidak mencerminkan keseluruhan jumlah tahanan operasional yang ada.¹¹

Memberi tahu tersangka akan hak-hak dasar mereka

36. Komisi tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan bahwa orang-orang yang dikenakan tuduhan pidana politik diberi tahu mengenai hak-hak dasar mereka sebelum menjalani persidangan. Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan bahwa pada saat ditahan, seseorang dapat meminta bantuan seorang pengacara yang dipilihnya sendiri (KUHAP pasal 55 dan 60) atau pengacara yang ditunjuk oleh Negara. Dalam kasus-kasus di mana seseorang menghadapi hukuman mati atau hukuman lebih daripada lima tahun penjara, pendampingan hukum ini adalah wajib mulai dari waktu penangkapan.

37. Semua kasus yang dipelajari masuk ke dalam kategori wajib adanya pendampingan hukum. Namun tidak ada satu pun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperiksa dari periode ini menunjukkan bahwa para tersangka diberi tahu akan hak ini, atau diberi kesempatan untuk didampingi penasihat hukum pilihan mereka sendiri.

38. Menurut hukum Indonesia, ada asas praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah (KUHAP Pasal 6). Orang-orang yang ditahan tidak pernah diberi tahu akan hal ini, dan mereka tidak juga diberi tahu bahwa mereka memiliki hak untuk memperlakukan keabsahan penangkapan dan penahanan mereka (Pasal 77 sampai 83). Para tersangka tidak pernah diberi tahu hak mereka untuk tidak mempersalahkan diri (Pasal 66).*

* “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

39. Sebelum dipindahkan ke penahanan polisi untuk menjalani pengadilan, para tahanan sering ditahan untuk jangka waktu yang lama oleh militer. Hal ini mengesampingkan standar hak asasi manusia internasional yang menuntut agar seseorang yang ditahan dengan dakwaan kriminal harus segera dibawa ke hadapan jaksa, dan tuntutan dalam Konvensi Jenewa IV mengatakan bahwa seseorang tertuduh yang diadili oleh kekuatan pendudukan harus dibawa ke pengadilan secepat mungkin.¹² Selama masa kediktatoran militer Soeharto, anggota militer diberi kewenangan untuk menyelidiki, menangkap, dan menahan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional.* (Wewenang ini dicabut setelah jatuhnya rezim Soeharto.) Akan tetapi, banyak dari orang-orang yang ditahan sebenarnya bukan merupakan ancaman bagi keamanan nasional, dan perlakuan terhadap para tersangka dalam tahanan melanggar banyak standar internasional tentang hak asasi manusia.

40. Selain itu Hukum Acara Pidana mensyaratkan bahwa aturan-aturan tertentu wajib dipenuhi jika hendak menggunakan bukti-bukti dalam pengadilan. Ketentuan-ketentuan ini di antaranya ialah bahwa para tersangka diberi tahu mengenai hak-hak mereka dan diberi kesempatan untuk didampingi pengacara mulai dari saat mereka ditangkap, khususnya selama tahap pemeriksaan dan interogasi. Berita-Berita Acara Pemeriksaan yang dipelajari Komisi tidak menunjukkan adanya seorang tersangka pun yang diberi tahu akan hal ini selama masa interogasi. Oleh karena itu, pengakuan-pengakuan yang dibuat dan bukti-bukti yang diberikan selama interogasi seharusnya tidak boleh digunakan untuk melawan para tersangka dalam pengadilan atas mereka. Walau demikian, Berita-Berita Acara Pemeriksaan ini dijadikan dasar bagi penghukuman sebagian besar tersangka yang diadili.

41. Berkas perkara David Dias Ximenes menunjukkan bahwa dia ditahan oleh ABRI sejak 16 Juni 1980. Pada 21 Februari 1984, dia diserahkan kepada polisi untuk diproses. BAP-nya mencantumkan tanggal 21 Februari 1984 juga. Sangat jelas bahwa dia ada dalam penahanan militer selama lebih daripada tiga tahun sebelum dialihkan ke sistem peradilan formal. Berkas perkara itu mengungkap bahwa Ximenes ditransfer ke sistem peradilan formal bersama enam tersangka lainnya; tiga di antaranya telah ditahan sejak November 1976.¹³

42. BAP Domingos Seixas tertanggal 6 Februari 1984 mencatat bahwa ia ditangkap pada 15 Agustus 1983 oleh Kodim, dan diserahkan ke KOREM 164/Wira Dharma. Pada 16 Agustus 1983, dia dipindahkan ke Denpasar, Bali, kemudian dipindahkan kembali ke Comarca Balide pada 9 November 1983. Tampaknya ia baru diserahkan kepada polisi pada 1 Februari 1984. Secara keseluruhan, ia berada dalam penahanan militer antara 3 sampai 6 bulan sebelum memasuki sistem peradilan pidana.

.....
* Wewenang ini berdasar pada surat resmi Presiden Soekarno pada Soeharto pada saat transisi kekuasaan. 'Surat Perintah 11 Maret' ini dipakai untuk membangun organisasi intelijen militer, yaitu Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), yang didominasi oleh para perwira militer, dengan Soeharto sebagai pemimpin utamanya. Wewenang Kopkamtib ini diperluas oleh Ketetapan MPRS (TAP MPRS No.IXMPRS/1966) yang selanjutnya diperluas lagi dalam Ketetapan MPR (TAP MPR No X/MPR/1971) dan diberi pengakuan resmi oleh Keputusan Presiden Soeharto No. 9/1974. Pada 1988, Kopkamtib dibubarkan dan digantikan oleh Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilisasi Nasional).

43. Ze Roberto, mantan Camat Illiomar, ditahan oleh militer pada November 1983, dan baru diserahkan kepada polisi pada 23 Maret 1984.¹⁴ Dengan demikian, dia ada dalam penahanan militer selama 4 sampai 5 bulan sebelum ia masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Wawancara-wawancara Komisi dengan para mantan tahanan politik menegaskan bahwa masa penahanan sewenang-wenang sering terjadi sebelum para tahanan diserahkan ke proses hukum. Caetano Guterres memberitahu Komisi bahwa ia ditahan pada September 1983 dan dibawa ke Kodim Dili, dan di sana ia dipukuli dan diinterogasi.¹⁵ Guterres bercerita bahwa ia ditahan selama tiga bulan oleh Kopassandha/Kopassus di Colmera (Dili), di sini ia diinterogasi setiap malam. Maria Immaculada Araújo ditahan oleh militer pada 12 Juni 1980 dan dibawa ke penjara Balide. Setelah setahun ia dipindahkan ke Ataúro selama tiga tahun. Ia kemudian dibawa kembali ke Kodim untuk waktu sebulan, lalu lebih lama lagi di Comarca, dan diinterogasi di kantor Sospol dalam rangka mempersiapkan pengadilannya pada Agustus 1984. Dengan demikian, ia ditahan selama 3 tahun lebih sebelum ia resmi dijadikan terdakwa.

44. Penahanan sewenang-wenang oleh militer dan perlakuan terhadap para tersangka selama masa penahanan prasidang ini seharusnya menjadi permasalahan besar yang perlu diangkat oleh polisi, jaksa, dan hakim pengadilan. Selain dari terungkapnya berbagai pelanggaran lewat perlakuan-perlakuan dari para perwira militer itu, permasalahan ini juga menimbulkan keraguan besar mengenai nilai dan keabsahan bukti yang disebut-sebut sebagai diberikan oleh para terdakwa selama dalam masa penahanan oleh pihak militer. Akan tetapi berkas-berkas pengadilan (termasuk dokumen-dokumen baku seperti dokumen tentang pemindahan tempat tahanan, penahanan, interogasi, dan ringkasan perkara) menunjukkan bahwa persoalan penahanan sewenang-wenang oleh pihak militer ini tidak pernah dianggap relevan oleh polisi, para jaksa, atau hakim yang terlibat dalam kasus-kasus ini.

Penyiksaan dan penganiayaan dalam tahanan

45. Penyiksaan merupakan hal yang sangat lazim pada hari atau minggu pertama penahanan, tetapi pada sementara kasus terjadi terus selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelum kasus dibawa ke pengadilan. (Untuk uraian lebih lanjut, lihat Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan.) Dalam banyak kasus, tidak ada bukti lain kecuali pengakuan-pengakuan yang diberikan selagi dalam keadaan disiksa dan diintimidasi di tempat penahanan, dan keterangan dari orang-orang lain yang juga ditahan oleh militer dan juga sedang menghadapi pengadilan.

46. Abilio Tilman salah seorang dari anggota-anggota klandestin pertama yang diadili. Ia memberitahu Komisi bahwa pada 12 September 1983, ia dibawa ke Koramil (Komando Rayon Militer) Dili Timur di Becora oleh kepala *aldeia* Mota Ulun di Santa Cruz, Dili, yang saat itu lalu diberi uang sebagai pembayaran karena telah menyerahkannya. Dari sini ia dibawa ke Kodim (Komando Distrik Militer) Dili, di mana ia ditinju dan ditendang oleh tentara di hidung dan dahinya hingga kulitnya robek dan berdarah. Keesokan harinya ia diinterogasi

oleh tentara yang memukulinya. Jika jawaban yang ia berikan tidak sesuai dengan tuduhannya, ia dipukuli hingga pingsan. Ia diberi makan sekali sehari dan luka-lukanya tidak dirawat.

47. Menurut Tilman, pada 12 November 1983 ia dan teman-temannya satu sel dipindahkan ke Comarca. Di sana, polisi militer menelanjangi dan menyiksa para tahanan laki-laki. Kunjungan Palang Merah Internasional (ICRC) menghentikan penyiksaan tersebut dan ia dibawa ke kantor Sospol (Sosial Politik) untuk diinterogasi. Di sini ia tidak disiksa, tetapi pemukulan dilanjutkan setelah ia dikembalikan ke Comarca. Tilman dihukum dan divonis tujuh tahun penjara. Ia dikirim ke penjara Cipinang di Jakarta untuk menjalani hukumannya.¹⁶

48. Anggota klandestin yang ditangkap bersama-sama dengan Aquelino Fraga Guterres mengenang:

Pertama mereka menghancurkan fisik saya, seperti dalam hal makanan tidak seperti biasanya, tapi porsinya hanya sedikit selama satu tahun. Setelah menjalani masa-masa sulit, kemudian saya diinterogasi, “Berapa kali mengadakan pertemuan dengan Falintil? Apa saja bantuan yang kau berikan kepada Falintil?” Dalam interogasi tersebut saya juga mereka pukuli dengan senjata, kaki saya ditindih dengan kursi, saya disetrum dengan listrik. Dalam waktu interogasi mereka bukannya mau mengetahui tentang kesalahan saya, melainkan “kesalahan” itu sudah mereka rancang dan dipaksakan pada kita untuk mengakunya. Seperti mengirim amunisi, supermi, baterai, dan... “kalau kalian mengakui seperti itu, maka anda akan mengikuti sidang dan cepat dibebaskan” [“kesalahan” itu yang dirancang oleh Kopassus]. Hal itu sangat bertentangan dengan batin saya, sehingga saya tidak mau mengikuti keinginan mereka...

Saya hanya diinterogasi oleh Kopassus. Dalam penahanan di SGI hanya orang tertentu [ABRI] boleh masuk dan melakukan interogasi. Waktu itu saya hanya melihat salah seorang intel, António [Manatuto] yang berasal dari Timor-Leste. Di sana Kopassus membentuk dua grup untuk melakukan interogasi dan penyiksaan. Waktu interogasi biasanya mereka lakukan pada malam hari, dan masing-masing orang akan ditahan di selnya masing-masing. Jika interogasi berlangsung, pertanyaan yang mereka ajukan harus dijawab dan mengakuinya. Jika tidak, saya akan dipukuli dan disetrum hingga mati lemas. Setelah sadar aku tetap disiksa.¹⁷

49. Amadeo da Silva Carvalho menceritakan kepada Komisi bahwa ayahnya, Luís, adalah seorang anggota klandestin. Ia ditangkap pada 20 Juni 1980 di Lecoto, Balibar, dan ditahan di Koramil Becora. Di sini setiap hari ia diikat di cabang tertinggi sebuah pohon. Ia dipindahkan ke bekas kantor desa Colmera Dili dan dimasukkan ke dalam tangki air yang diisi biawak. Komisi telah menerima sejumlah kesaksian dari korban-korban yang lain tentang penggunaan biawak

dalam penyiksaan (lihat Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan, dan Penganiayaan). Luís dipaksa berkelahi dengan tahanan yang lain. Ia dikirim dari Dili untuk ditahan di Ataúro pada 4 Agustus 1980. Pada 1983, Luís adalah satu dari delapan tahanan yang dibawa dari Ataúro untuk diadili.¹⁸

50. Antonio Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak) juga melaporkan bahwa ia digantung dengan kepala di bawah di sebuah pohon, hingga sendi kakinya patah, sebagai bentuk penyiksaan:

Proses keadilan seperti ini: mereka lakukan interogasi sampai di Kupang, kembali ke Korem Dili, kemudian membawa saya, mengikat saya di bawah pohon beringin [yang dulu tempat Polisi Militer, PM] dengan posisi kepala saya di bawah, kaki saya di atas. Ini yang membuat kaki saya patah sampai sekarang dan saya tidak bisa berjalan tegak.¹⁹

51. Pejabat Indonesia menyatakan bahwa kondisi penjara tersebut layak, bahkan lebih baik daripada kondisi penjara selama masa kolonial Portugis. Kepada para anggota DPR Indonesia yang berkunjung pada 1985, petugas keamanan mengatakan bahwa “pendekatan kemanusiaan” selalu digunakan dalam penangkapan dan interogasi. Seorang reporter Indonesia yang mengunjungi Dili pada tahun yang sama menulis:

Di Penjara Balide [Comarca], yang berisi 129 narapidana dan 29 tahanan termasuk 3 wanita, tidak ada kesan sebuah penjara. Pintunya selalu terbuka, pengawasan tidak ketat, dan dengan pendekatan kemanusiaan, terdapat rasa saling percaya antara petugas penjara dan narapidana. Ketika koresponden ini bertanya “Apakah Anda tidak khawatir akan ada yang kabur?” Mayor Mustari menjawab, “Kalau sekarang tidak terlalu. Mereka lebih aman di sini, dan bahkan ada yang tidak mau pulang.²⁰

Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

52. Setelah interogasi, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditulis untuk ditandatangani oleh tersangka. Komisi telah menerima kesaksian, yang dibahas di bawah ini, bahwa dalam banyak kasus BAP tidak mencerminkan apa yang diungkapkan tersangka selama interogasi. Tidak satu pun dari kasus-kasus yang dipelajari menunjukkan tentang adanya pengacara yang mewakili tersangka selama interogasi atau pada saat penandatanganan BAP.

53. Selain adanya penyiksaan selama penahanan seperti yang dijelaskan di atas, terdapat laporan adanya intimidasi dan ancaman terhadap tersangka saat diminta menandatangani BAP, mulai dari larangan mendapat kunjungan dari keluarga sampai hukuman penjara seumur hidup. Aitahan Matak dibawa kembali dari Kupang pada 24 Agustus 1984, tetapi persidangannya ditunda karena ia menolak

bekerja sama. Setelah ditekan selama berbulan-bulan, ia setuju menandatangani BAP dan hadir sebagai saksi:

Dan mereka berbicara dalam bahasa yang halus, bahwa “saudara Antonio Aitahan Matak, anda terima saja supaya bisa bertemu dengan keluarga, anda juga masih muda, supaya bisa menikah. Jika saudara tidak mau disidang, saudara akan mati di penjara; saudara tidak bisa lolos dari penjara”. Orang sudah menulis, kami tinggal setuju saja.²¹

54. Cerita ini sesuai dengan laporan organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional pada masa itu. Pada 1988, Amnesty International mencatat:

Banyak tahanan yang sudah bebas, ternyata telah diadili atas dasar kesaksian palsu, atau kesaksian di bawah tekanan, setelah melalui periode panjang penahanan *incommunicado*. Selama itu beberapa dari mereka menyatakan, telah menandatangani “pengakuan” dan dibawa ke pengadilan, agar mereka itu mendapat kesempatan untuk menerima kunjungan keluarga.²²

55. Beberapa tahanan bersedia menandatangani BAP dengan sukarela untuk menjaga kerahasiaan kegiatan klandestin yang lain. Aquelino Fraga Guterres setuju menandatangani BAP ketika ia melihat bahwa BAP ini sebagian besar mengenai pelanggaran ringan, dan tidak menunjuk pada kepemimpinan jaringan klandestin Dili atau pengiriman informasi rahasia ke luar negeri. Begitu juga yang terjadi pada Marito Reis, ia bersedia menandatangani BAP agar dapat diadili, ketimbang harus ditahan diam-diam tanpa batas waktu sampai kapan. Dibawa ke pengadilan setidaknya-tidaknya berarti masyarakat menjadi tahu di mana mereka yang menjadi tersangka itu berada.

56. Beberapa tahanan menolak bekerja sama, meskipun menghadapi ancaman dan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Setelah hampir dua tahun dalam penahanan, lima puluh orang tahanan, termasuk sembilan belas orang dari Baucau, dibebaskan pada 27 April 1985 dalam suatu upacara publik. Satu anggota kelompok ini, Cristiano Da Costa, menyatakan kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB bahwa:

Banyak tahanan politik dipaksa menandatangani pengakuan palsu, yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pengadilan sandiwara...Saya sendiri dan 49 orang lainnya, menolak menandatangani pengakuan palsu ini, sehingga kami tidak pernah diadili. Pada tanggal 27 April 1985 setelah 20 bulan dalam penjara, kami yang menolak ikut pengadilan akhirnya dibebaskan. Kami lalu harus melapor setiap minggu ke komando militer Indonesia.²³

57. Penerjemahan merupakan satu persoalan pada banyak sidang pengadilan. Terdakwa diinterogasi tanpa penerjemah, dan harus menandatangani dokumen-dokumen yang berisi pengakuan bersalah, yang ditulis dalam bahasa yang tidak mereka mengerti.

58. Dalam satu contoh, berkas pengadilan mengungkapkan bahwa BAP Domingos Seixas yang ditulis dalam bahasa Indonesia dianggap sebagai bukti dalam sidang pengadilannya, walaupun tanpa adanya penerjemah yang dihadirkan untuknya saat ia diinterogasi dan menandatangani BAP. Kemudian transkrip sidang pengadilan dalam berkas yang sama mengungkapkan bahwa di sidang pengadilan para hakim memutuskan bahwa bahasa Indonesia Domingos Seixas tidak cukup baik dan bahwa ia memerlukan pendampingan seorang penerjemah, yang akan membantunya sepanjang sidang pengadilannya berlangsung. Meskipun jelas mereka nyatakan bahwa Domingos Seixas memerlukan penerjemah selama persidangan, namun baik hakim maupun penasihat hukum tidak mempertanyakan keabsahan BAP Domingos Seixas yang telah ditandatangani, yang telah digunakan sebagai bukti tentang dirinya, padahal BAP itu ditulis dalam bahasa Indonesia tanpa adanya bantuan seorang penerjemah.

Sidang Pengadilan

59. Walaupun sebagian besar sidang pengadilan dilakukan di Dili, ada laporan tentang sidang-sidang yang diadakan di Baucau, Suai dan Bali.²⁴

60. Dalam pengadilan-pengadilan politik yang diselenggarakan selama periode 1983-1985, latar belakang terdakwa bermacam-macam; mulai dari petani desa hingga pemimpin klandestin kota. Terdakwa termuda dalam kasus-kasus yang diselidiki oleh Komisi ialah Sabino Barreto, 14 tahun, dan yang tertua adalah Caetano Ximenes, 72 tahun, tetapi sebagian besar terdakwa adalah laki-laki usia duapuluh atau tigapuluh tahun. Rata-rata lamanya hukuman yang dijatuhkan sedikit menurun sepanjang periode ini, yaitu dari tujuh tahun delapan bulan dalam 1983, sampai dua tahun dan sembilan bulan dalam 1985.*

61. Umur rata-rata sedikit turun, dari 37,8 pada 1983, ke 31,4 pada 1985. Kecenderungan ini mungkin bisa menjadi petunjuk bahwa pada menjelang akhir periode ini jaksa lebih memusatkan perhatian pada anggota biasa gerakan klandestin, ketimbang kepada para pemimpinnya.

Dakwaan

62. Orang-orang yang diadili karena tindak pidana politik selama 1983-1985 hampir semuanya didakwa melakukan makar, berdasarkan Pasal 106, 108, dan 110 KUHP.²⁵ Lima puluh satu dari kasus-kasus tersebut dikenai dakwaan primer yang serupa, dan beberapa terdakwa dikenai dakwaan subsider seperti Pasal 169 (menjadi anggota kelompok ilegal).† Satu-satunya terdakwa yang tidak dikenai pasal

* Penghitungan ini dibuat oleh CAVR berdasarkan lembaran sidang pengadilan yang terdapat dalam arsip pengadilan. Angka untuk 1986 sama dengan angka untuk 1985.

† Hitungan berdasarkan lembaran pengadilan yang ditemukan dalam arsip pengadilan. Dalam kutipan yang lain Amnesty International mencatat kasus seorang terdakwa yang didakwa dengan tidak melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri, sedangkan yang lain karena menghina presiden.

pengkhianatan adalah João Soares.²⁶ Ia didakwa dengan Pasal 134 karena melakukan penghinaan terhadap presiden.* Pengadilan sering tidak lagi mempertimbangkan dakwaan subsider apabila dakwaan primer telah terbukti.²⁷

63. Sebagian besar dakwaan yang diberikan bermula dari satu atau dua kejadian, biasanya pertemuan-pertemuan, di tempat perbuatan makar yang dituduhkan dilakukan. Dalam sebagian besar kasus, jaksa penuntut mengakui bahwa penangkapan yang dilakukan mencegah terjadinya tindak kekerasan, dan bahkan non-kekerasan, yang telah direncanakan.²⁸ Oleh sebab itu tidak perlu ditunjukkan bahwa tindakan yang direncanakan tersebut telah dijalankan agar dapat menjadi suatu tindak pidana. Selain itu, tidak perlu pula membuktikan adanya kesepakatan aktif atau formal untuk melakukan pengkhianatan.

64. Dalam beberapa kasus, pengadilan menyatakan bahwa sudah menjadi hal yang diketahui umum kalau Timor-Leste telah berintegrasi dengan Indonesia, dan bahwa tujuan Fretilin adalah untuk memisahkan Timor-Leste dari Indonesia.²⁹ Karena itu tindakan apapun yang mendukung Fretilin adalah tindak perbuatan makar.

65. Banyak dari mereka yang ditangkap dan diadili memang terlibat langsung dalam mengorganisasi gerakan klandestin untuk menyokong kemerdekaan. Beberapa orang lainnya hanya terlibat secara tidak langsung, misalnya karena memberi makan atau bantuan kecil lainnya pada pejuang prokemerdekaan. Beberapa lainnya lagi sebenarnya tidak ikut serta dalam menyokong gerakan kemerdekaan dalam bentuk apapun. Cara-cara melakukan interogasi dan pemalsuan bukti-bukti selama persidangan berarti bahwa tidak mungkin bagi mahkamah pengadilan untuk memastikan dengan tegas peranan apa yang sesungguhnya telah dilakukan oleh para terdakwa yang bermacam-macam itu. Keputusan mereka didasarkan pada gambaran yang dibentuk selama interogasi, dan persiapan serta pelaksanaan sidang pengadilan yang dibikin menyimpang.

66. Banyak dari para tersangka ini dituduh mengadakan pertemuan rahasia dan mendukung kemerdekaan, serta memberikan bantuan langsung bagi gerakan gerilya kota yang muncul. Tersangka yang lain didakwa atas aktivitas mereka di masa lalu, seperti David Ximenes dan Mariano Bonaparte, yang didakwa terkait dengan peristiwa penyerangan Marabia tahun 1980-an. Pengadilan-pengadilan politik yang paling awal, pada Desember 1983, menyangkut beberapa terdakwa yang dituduh merekrut komandan-komandan kompi dengan rencana untuk mendapatkan senjata dan meningkatkan penyerangan di kota-kota, meskipun mereka telah ditangkap sebelum mereka bisa berbuat banyak. Para terdakwa dituduh melakukan rencana untuk kedatangan PBB, atau bahkan mencari tentara asing yang akan membantu Fretilin menyerang Dili.

67. Selama periode ini telah terjadi peningkatan kegiatan klandestin di kota-kota. Menurut Aitahan Matak, ketika pejuang Falintil dihalang-halangi untuk kembali ke pegunungan setelah mengunjungi keluarga mereka di kota-kota selama gencatan

* Bagian 134 berbunyi: "Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."

senjata, kelompok bawahanah bergerak untuk membangun kembali struktur klandestin bilamana Xanana Gusmão tertangkap.³⁰ Beberapa contoh sidang pengadilan yang berkaitan dengan jaringan klandestin kota antara lain:

- Marito Reis, yang baru saja dibebaskan dari penahanan di Ataúro dan bekerja sebagai sopir Kepala Seksi Intelijen I (Kasi I) Korem Willem da Costa. Ia juga bekerja untuk menghidupkan jaringan klandestin Dili setelah peristiwa penyerangan Marabia pada 1980-an. Menurut Marito Reis, pihak penguasa menjadi curiga setelah sebuah surat kabar bawahanah mulai beredar, dan menangkap Reis bersama-sama dengan anggota klandestin yang lain. Mereka dibawa ke Bali, tetapi kemudian dikembalikan ke Dili dan diajukan ke pengadilan.³¹
- Henrique Belmiro didakwa melakukan perbuatan makar karena keterlibatannya dalam suatu pertemuan pada 1982, yang menghasilkan kesepakatan untuk mencari anggota baru yang bersimpati kepada Fretilin, guna membentuk kelompok-kelompok yang mendukung kegiatan Fretilin dan mengirim bantuan logistik ke gunung-gunung, dengan tujuan akhir memisahkan Timor-Leste dari Indonesia dan menciptakan Timor-Leste merdeka.³²
- Armindo Florindo didakwa melakukan perbuatan makar karena pertemuan dengan Albino Lourdes pada 15 Desember 1982 dan ditunjuk sebagai pemimpin kelompok klandestin yang bertugas mencari anggota baru.³³
- Caetano Guterres, pemimpin Fretilin yang menyerah pada 1979 dan diberi tugas menyusun kegiatan klandestin di Dili. Ia menghabiskan beberapa tahun menyelundupkan dokumen ke luar negeri, ke *Frente Diplomática*. Ia menerima surat pada pertengahan tahun 1983 yang menyuruhnya menghentikan kegiatan klandestinya. Namun, tiga hari kemudian ia ditangkap. Dakwaan utamanya ialah makar, khususnya bahwa Guterres telah bertemu dengan Albino Lourdes di rumahnya bersama José da Conceição, dan secara terpisah berbincang-bincang dengan Jacinto Alves di kantor mereka. Seorang saksi menyatakan bahwa Guterres diberi tugas menjadi perantara pengiriman surat dari gerakan klandestin di hutan ke luar negeri, melalui Uskup Martinho Lopes. Ia didakwa mengirim surat ke Portugal, Australia, Mozambik, dan PBB, serta mengirim buku tulis, amplop, dan kaset-kaset kosong ke seorang pemimpin klandestin di Baucau.³⁴
- David Dias Ximenes, yang dakwaan utamanya didasarkan atas pertemuan dengan Mariano Bonaparte, Januario Ximenes, Danilo da Silva, João Cristo Rei, dan Mateus Amaral, antara Juli 1979 dan 1980 di rumah Januario Ximenes dan Mariano Bonaparte. Para peserta pertemuan tersebut didakwa berbuat makar karena berencana mengumpulkan pejuang untuk menyerang Dili, dengan tujuan akhir untuk memisahkan Timor-Leste dari Indonesia.³⁵
- Domingos Seixas,³⁶ yang dituduh memimpin dua pertemuan klandestin pada November dan Desember 1982 di mana ia melaporkan pembunuhan 15 anggota TNI di wilayah timur, membicarakan berita siaran Radio Australia tentang bantuan Australia dan Portugal, yang akan datang

menjelang Natal, dan melaporkan kemungkinan adanya referendum dan bahwa rakyat harus siap menghadapinya. Mereka yang hadir setuju membantu Fretilin dalam perjuangannya. Menurut penguasa: “Terdakwa, Domingos Seixas, dengan bersemangat setuju menjalankan tugas dengan harapan bahwa jika Fretilin menang ia dapat bekerja lagi di rumah sakit dengan gaji yang tinggi.”

68. Dari 200 orang lebih yang diadili antara 1983 dan 1985 kebanyakan bukanlah merupakan pemimpin klandestin, dan walaupun ada, hanya pernah memiliki kontak terbatas dengan gerilyawan. Para terdakwa termasuk mereka yang dituduh membantu pertemuan-pertemuan Falintil di daerah, dan dalam banyak kasus lainnya bantuan tersebut berupa rokok, tuak putih, atau beras.⁷ Pengadilan atas pendukung gerakan perlawanan setempat termasuk:

- Francisco Mendez dituduh melakukan perbuatan makar pada atau sekitar 15 Juli 1983 di Kolorau (Same, Manufahi) dengan mengadakan pertemuan dengan anggota GPK dan setuju mendukung mereka. Kemudian dikatakan bahwa untuk menunjukkan dukungannya, “tersangka memberikan barang berupa 1 bungkus rokok merek Ribbon dan Tembakau Timor dan atau tembakau jenis lainnya.”³⁷ Ia pun dituduh setuju mendukung perjuangan GPK, “sedangkan mengetahui dengan pasti bahwa Wilayah Timor Timur sudah berintegrasi dengan RI pada 1976.”³⁸ Seorang saksi memberikan kesaksian di pengadilan, bahwa terdakwa memberikan bantuan, tetapi tidak pernah menyebutkan apapun tentang mendukung kemerdekaan.
- Gil Fernandes dituduh melakukan pertemuan dengan anggota Fretilin sebanyak empat kali antara Maret 1984 dan April 1985 di Maupitine (Lospalos dan Lautém) untuk memberikan informasi tentang kekuatan angkatan bersenjata di wilayah tersebut, lokasi pos-pos dan patroli-patroli, serta memberikan beberapa kilogram jagung dan beras, baju-baju, dan buku catatan. Bantuan tersebut dianggap memiliki arti khusus karena pada Mei 1984 GPK menyerang sebuah pos ABRI, yang mengakibatkan kematian sembilan orang tentara Indonesia.³⁹
- Maria Imaculada Araújo dikenai tuduhan makar atas dasar pertemuan pada Mei 1980 di Lahato, Dili Timur, di mana, menurut dakwaan tersebut, ia dan tiga perempuan lainnya “secara resmi diterima sebagai anggota OPMT (Organizacao Popular Muther Timor; Organisasi Perempuan Rakyat Timor)...yang bertugas mengumpulkan informasi tentang kekuatan ABRI di Dili, mencari makanan, minuman, dan obat-obatan”. Dakwaan tersebut menyatakan bahwa Imaculada “mengetahui bahwa organisasi OPMT adalah gerakan ilegal yang bertujuan mendukung perjuangan Gerakan Pengacau Keamanan/Fretilin dengan

* Berkas perkara No.99/PID/B/85/PN.DIL. Maria Amelia Sousa didakwa turut serta dalam rapat gelap dan menyediakan sagu, jagung, ubi kayu, dan buku catatan bagi GPK [lihat Surat Dakwaan terhadap Maria Amelia Sousa dan Surat Tuntutan terhadap Maria Amelia Sousa dalam berkas perkara No. 30/PK/1985]. Joki de Sousa didakwa dengan dakwaan menyediakan ubi kayu dan tuak putih dan informasi tentang kekuatan ABRI di wilayah tersebut [Berkas perkara No.25/PID/B/1985/PN.DIL].

jalan kekerasan/perang.” Menurut Imaculada, ia ditangkap karena “pada saat itu kami bersama-sama berkumpul membentuk struktur klandestin untuk membantu pasukan perlawanan. Kami bantu mereka dengan informasi, panduan, dan logistik.”⁴⁰

- Ze Roberto Seixas Miranda Jeronimo, Camat Iliomar (Lautém), dituduh mengancam keamanan nasional dan berkonspirasi melakukan tindak kejahatan. Tuduhan subsider ialah melanggar Pasal 108 KUHP.⁴¹ Sebagai pegawai negeri, ia dinyatakan telah berhubungan dengan Fretilin selama gencatan senjata dengan maksud membujuk mereka menyerah. Namun setelah itu, ia tetap berhubungan dan memberikan bantuan kepada mereka. Ia mengirim rokok dan obat-obatan melalui para penghubung. Ia dituduh berencana membunuh komandan Hansip (Pertahanan Sipil) setempat beserta wakilnya, dan bertindak sebagai penghubung antara pihak gerakan Resistansi di hutan Lospalos dan mereka yang ada di Dili. Ia dikenai tuduhan makar yang mengancam keamanan nasional, dan tuduhan terlibat dalam perencanaan untuk melakukan kejahatan. Dakwaan subsider terhadapnya ialah melanggar Pasal 108.

Kondisi ruang persidangan

69. Sidang-sidang pengadilan pertama kali dilaksanakan di bekas gedung sekolah menengah atas Portugis (Liceu), di seberang bekas klub olahraga Benfica, tempat kantor kejaksaan berada. Pengadilan tersebut kemudian dipindah ke gedung yang kini adalah Pengadilan Negeri Dili di Mandarin. Pengadilan-pengadilan tersebut dapat diputuskan dalam satu hari, atau dilaksanakan sebanyak tiga atau empat persidangan selama beberapa minggu. Kasus-kasus lain yang melibatkan saksi-saksi yang sama sering diselenggarakan pada hari yang sama.

70. Tiap sidang diawali dengan pengumuman dari hakim bahwa pengadilan tersebut adalah pengadilan terbuka, tetapi praktiknya kehadiran militer dan intelijen menciptakan suasana yang menakutkan yang membuat orang-orang tidak datang. Caetano Guterres melaporkan bahwa pada pengadilannya pada 1984, setiap orang, kecuali istri dan anaknya, takut menghadiri persidangan. Antonio Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak) menceritakan bahwa para anggota keluarga pun diintimidasi oleh polisi militer ketika mereka menghadiri persidangannya.

71. Pemerintah menolak permintaan Amnesty International untuk mengirim pengamat pada 1984, dan menyatakan bahwa pengadilan-pengadilan yang diadakan adalah “benar-benar masalah yurisdiksi domestik.”⁴²

72. Selama tahun-tahun awal setelah invasi, para terdakwa hanya sedikit, atau samasekali tidak, berbahasa Indonesia, dan meminta penerjemah. Para penerjemah biasanya orang-orang Timor anggota kepolisian.

Keterangan saksi

73. KUHP mensyaratkan minimal dua bukti agar suatu tuduhan dicatat. Pihak berwenang secara formal, jika tidak secara substansial, menaati aturan ini.

Dalam semua kasus yang diteliti terdapat dua bukti, yang biasanya dalam bentuk pernyataan saksi dan sering dalam bentuk bukti fisik.

74. Namun bukti yang diberikan kepada Komisi menunjukkan bahwa banyak saksi dipaksa bersaksi, dan saat memberikan kesaksian banyak yang dipaksa memberikan bukti memberatkan yang berkaitan dengan pengadilan atas mereka sendiri. Banyak tahanan yang telah ditahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, mengalami penyiksaan dan kehilangan kontak dengan keluarga dan pengacara. Sebagai akibatnya, mereka rentan untuk dipaksa menandatangani pengakuan palsu atas kasus mereka sendiri, dan juga memberikan kesaksian atas terdakwa yang lain.

75. Komisi menerima, dengan dasar bukti yang sudah dibenarkan dengan kuat, bahwa terdapat sistem disiplin yang dipatuhi di antara orang-orang yang terlibat dalam gerakan klandestin, seperti menggunakan nama-nama samaran setiap saat. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa orang-orang tidak saling mengenal jika mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Mereka mungkin pernah mendengar tentang orang-orang tertentu, tetapi selalu menyebut mereka dengan nama samaran ini, sehingga benar-benar tidak bisa mengatakan siapa orang-orang ini sebenarnya.

76. Banyak terdakwa menyatakan dalam persidangan bahwa mereka mengenali sesama terdakwa, dengan demikian memberatkan mereka. Walaupun sebenarnya mereka tidak pernah kenal sebelumnya, dan tidak bisa benar-benar mengatakan siapa orang-orang yang dikenal dengan nama-nama samaran tersebut. Kesaksian palsu yang menjadi dasar bagi banyak hukuman yang dijatuhkan ini merupakan hasil penyiksaan dan intimidasi. Aitahan Matak, yang mengatakan bahwa ia bahkan tidak mengenal saksi-saksi yang memberatkannya, menggambarkan bagaimana para tahanan dikelompokkan:

Ketika kami dibawa ke pengadilan, antara 9-12 orang yang mengikuti sidang dalam satu hari, dan yang mengikuti sidang ini dipasang tiga-tiga orang saling berdampingan dan saling memberi kesaksian antara satu dengan yang lain.

Tiga-tiga orang yang dipasang saling memberatkan semua dan saksi itu hanya tahu memberatkan, bukan menjadi saksi...Bagaimana saya bisa mengenal nama anda, karena kami mengikuti sumpah di hutan untuk tidak menyebut nama siapapun. Saya, ya, saya; anda, ya, anda. Akan tetapi Bapak [ABRI] mempunyai cara lain untuk menghadapi strategi kita, mereka memasang tiga-tiga orang bersama. Besok kakak tidak kenal sama saya, Setelah dipukul, disiksa, telah mengenal saya, dan kakak mengikuti sidang pertama divonis lima tahun penjara. Besok saya mengikuti sidang, dua orang teman menjadi saksi dan sekaligus memberatkan, dan lusa teman yang lain lagi mengikuti sidang, kami berdua menjadi saksi sekaligus memberatkannya, agar kami sebagai terdakwa, saya divonis lima tahun penjara, sedangkan dua orang teman, yang satu divonis empat tahun penjara, sedangkan satu orang lagi divonis tiga tahun.⁴³

77. Di bawah tekanan, Aitahan Matak bersedia bersaksi terhadap dua kawan dalam grupnya yang terdiri atas tiga orang itu, meskipun ia tidak mengenal mereka:

Saya juga mereka paksa supaya saya bisa akui mereka dua-dua punya salah. Saya tidak tahu Augusto di Dili, saya tidak tahu Jose Augusto di Quelicai, saya di Viqueque kerja sama Daniel João Batista. Tapi orang paksa kami tiga orang itu.⁴⁴

78. Para pemimpin klandestin, Caetano Guterres, Marito Reis, dan Albino Lourdes, semua saling bersaksi pada pengadilan mereka masing-masing. Dalam satu di antara kasus-kasus yang pertama, para saksi dalam pengadilan José Simoes adalah para terdakwa dalam kasus-kasus lain di mana José Simoes menjadi saksi; yaitu dalam kasus Antonio José Eduardo (ipar dari Simoes), Abilio Tilman, dan Fernando Pinto Baptista.

79. Amnesty International juga melaporkan praktik-praktik ini kepada Komisi Dekolonisasi PBB, dengan memfokuskan pada kasus Agapito da Silva yang dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada Agustus 1984 setelah ditahan selama empat tahun.⁴⁵ Saksi-saksinya hanyalah dua orang terdakwa lain, yang juga ditahan dan disiksa selama empat tahun. Mereka dipaksa membuat pernyataan, atau jika tidak mau, mereka tidak akan diadili, dan akan terus ditahan dan disiksa selamanya. Jika mereka disidangkan, setidaknya-tidaknya perkara mereka menjadi didengar umum, umum menjadi tahu tentang penahanan mereka, dan merupakan saat berakhirnya masa penahanan.

Hak untuk memilih penasihat hukum dan untuk pembelaan yang efektif

80. Pada 1984, dalam suratnya kepada Amnesty International, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menulis:

Sesuai dengan hukum acara pidana dan perdata Indonesia, masing-masing terdakwa dapat menunjuk penasihat hukumnya (pengacaranya) sendiri, atau dalam hal ia tidak mampu membayar biaya pengacara, terdakwa akan disediakan penasihat secara cuma-cuma dari kelompok-kelompok konsultan hukum yang diakui.⁴⁶

81. Namun dalam praktiknya, para terdakwa tidak diberitahu tentang haknya untuk memperoleh pengacara, apalagi diizinkan memilih pengacara sendiri. Kenyataannya, tidak ada pengacara independen yang bekerja di Timor saat itu. Para pengacara yang disediakan oleh negara dipilih dari Lembaga Bantuan Hukum Trisula di Kupang, Timor Barat. Dokumen-dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa para terdakwa tidak diberi kesempatan memilih penasihat hukum mereka sendiri.

82. Contohnya dalam kasus Domingos Seixas, pihak pengadilan menunjuk Merry S. Doko dan Saartje Seubelan sebagai penasihat hukum pada 9 Maret 1984, atas inisiatif pihak pengadilan sendiri dan tanpa berbicara dengan pihak

terdakwa. Pada 13 Maret 1984, pengadilan menunjuk Merry S. Doko dan Saartje Seubelan sebagai penasihat hukum bagi David Dias Ximenes; sekali lagi atas inisiatif pihak pengadilan sendiri dan tanpa berbicara dengan pihak terdakwa. Berkas Francisco Mendez menyebutkan bahwa ia secara resmi ditahan sejak 10 Desember 1984, tetapi tidak didampingi pengacara yang ditunjuk hingga putusan hakim dijatuhkan pada 3 Januari 1985.⁴⁷ José Simoes, ditahan sejak Agustus 1983 dan diinterogasi sejak Oktober tahun itu, tidak didampingi pengacara hingga 7 Januari 1984.⁴⁸ Hampir setiap terdakwa diwakili oleh salah satu atau dua dari tiga pengacara yang sama: Merry S. Doko, Asmah Achmad, dan Saartje Seubelan, walaupun kenyataannya tidak seorang pun dari orang-orang yang mereka bela itu telah dibebaskan dari segala tuntutan. Ketika Marito Reis menolak diwakili pengacaranya, Merry S. Doko hadir tetapi tidak aktif dalam proses peradilan, dan tidak ada alternatif yang ditawarkan.⁴⁹

83. Dalam banyak kasus, para terdakwa pertama kali bertemu dengan para pengacara mereka pada saat sidang pengadilan.⁵⁰ Tinjauan tentang proses peradilan tersebut, meskipun belum tentu akurat atau lengkap, membenarkan bahwa hanya ada sedikit usaha untuk memeriksa silang para saksi atau untuk membuktikan ketidakbenaran elemen-elemen dakwaan. Beberapa pleidoi sangat mirip dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh jaksa.

84. Contohnya, pleidoi Henrique Belmiro mengulas keterangan-keterangan saksi, yang banyak di antaranya mengandung implikasi negatif bagi terdakwa, dan tampaknya digunakan sebagai alasan bahwa terdakwa memang bersalah, alih-alih untuk membebaskannya dari kesalahan. Ini termasuk pernyataan-pernyataan atas nama pembelaan, seperti “Tujuan utama pertemuan rahasia ini adalah memisahkan Timor-Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan membentuk negara tersendiri yaitu Republik Demokratik Timor-Leste.” Satu-satunya argumen yang dibuat dalam pembelaan ialah bahwa terdakwa hanyalah seorang pengangguran yang putus asa, yang tidak memiliki alasan kuat untuk menuntut pemisahan diri dari Indonesia.⁵¹

85. Pernyataan pembelaan yang diajukan oleh para pengacara David Dias Ximenes diawali dengan ungkapan rasa hormat yang berlebihan kepada pengadilan. Hal ini sangat berlawanan dengan kesaksian Komisi, yaitu bahwa tertuduh tidak mengakui kewenangan pengadilan atau hak mereka untuk menuntut dirinya. Pembela kemudian membaca seluruh bukti dan tuntutan hukuman, hanya untuk menyimpulkan bahwa jaksa telah berhasil membuktikan semua elemen kejahatan klien mereka.⁵² Oleh karena itu, satu-satunya yang mungkin dapat dilakukan hanyalah usaha pengurangan hukuman. Penasihat hukum samasekali tidak menyebutkan fakta bahwa terdakwa telah berada dalam penahanan sewenang-wenang selama tiga tahun lebih, juga tidak mengajukan keberatan bahwa Ximenes tidak diberitahu tentang haknya yang mutlak untuk didampingi pengacara sejak saat penangkapan. Tidak ada keberatan yang diajukan tentang sifat bukti yang diajukan untuk memberatkan terdakwa.

86. Situasi yang sama terjadi pada pembelaan kasus Ze Roberto Seixas Miranda Jeronimo. Penasihat hukum menyetujui kasus yang diajukan jaksa dan mengajukan faktor-faktor yang meringankan atas nama klien mereka. Tidak ada kata-kata mengenai penahanan sewenang-wenang, perlakuan terhadap terdakwa atau para saksi, atau wawancara dengan klien tanpa kehadiran pengacara.

87. Transkripsi persidangan Domingos Seixas merangkum upaya pembela hukumnya sebagai berikut: “Tim pembela pada prinsipnya ingin menyatakan bahwa mereka setuju dengan tuduhan Jaksa Penuntut Umum, yakni, bahwa memang telah terbukti tentang adanya pelanggaran pasal 110(1) dan pasal 106 KUHP dan menyerahkan nasib terdakwa ke tangan para Hakim.”⁵³

88. Tidak seperti pengadilan-pengadilan sesudahnya, banyak berkas dan rekaman proses peradilan dari periode ini tidak memuat pernyataan pada putaran kedua, yang lazimnya dibuat oleh jaksa dan tim pembela (replik dan duplik). Satu dari sedikit tanggapan jaksa yang tercatat berisi evaluasi yang menggambarkan kualitas pembelaan. Pernyataan sepanjang satu halaman tersebut menyatakan:

Setelah kami mendengarkan, selanjutnya menilai pleidoi Saudara Pembela, pada akhirnya kami berpendapat dan berkesimpulan, bahwa oleh karena Saudara Pembela telah sependapat dengan kami, dan prinsipnya hanya memohonkan keringanan pidana terhadap terdakwamaka kami, selaku Jaksa Penuntut Umum dalam kasus perkara atas nama terdakwa Abilio Tilman, kiranya tidak perlu lagi mengadakan tanggapan-tanggapan tambahan.⁵⁴

89. Banyaknya beban kasus yang ditangani para pembela juga telah berdampak buruk pada kualitas pembelaan mereka. Ketiga pengacara dari Kupang tersebut mewakili semua 232 terdakwa politik dari 1983 sampai 1985, selain menangani banyak kasus pidana biasa selama periode itu. Kenyataan bahwa mereka dilaporkan membagi waktu antara Dili dan Kupang menunjukkan betapa mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mempelajari seluk-beluk tiap kasus mereka. Hal ini mungkin bisa menjelaskan, mengapa submisi-submisi mereka persis sama dengan dalam banyak kasus yang mereka tangani. Pada 1985 *Far Eastern Economic Review (FEER)* memberitakan bahwa para pembela yang bekerja di Timor-Leste mengakui bahwa pleidoi bersalah itu untuk menghemat waktu.⁵⁵ Selanjutnya ada pertentangan kepentingan yang nyata antara ketiga pengacara ini, yaitu bahwa mereka menangani kasus-kasus di mana klien-klien mereka menjadi terdakwa dalam satu kasus dan saksi dalam kasus-kasus yang lain, termasuk sebagai saksi memberatkan terhadap klien-klien yang lain.

90. Ternyata bahwa kontrol militer terhadap proses jalannya sidang, termasuk penyiksaan, intimidasi, dan pemalsuan bukti, terus berlanjut sampai di dalam ruang sidang itu sendiri. Hal ini mempertegas bahwa pada kenyataannya penasihat hukum tidak pernah bisa mengajukan pembelaan yang semestinya bagi klien-klien mereka. Para mantan tahanan politik mempunyai tanggapan yang berbeda-

beda ketika ditanya tentang mutu perwakilan hukum mereka. Caetano Guterres teringat apa yang dikatakan Merry S. Doko, penasihat hukum yang ditunjuk mahkamah pengadilan:

Kami hanya membantu kalian saja, tetapi kami sudah mendapat orientasi dari militer. Kami hanya mengikuti kehendak militer saja. Artinya, jika mereka bilang A, ya A; jika mereka bilang B, ya B...Kami mengikuti saja orientasi dari militer, Kami tidak bisa berbuat sesuatu, melainkan hanya duduk saja.⁵⁶

91. Selain bukti yang diterima Komisi mengenai ketidakmampuan samasekali dari penasihat hukum, atau tidak adanya kehendak mereka untuk membela klien dengan selayaknya, sementara tertuduh mengaku bahwa para pembela telah berusaha membantu mereka, walaupun sangat sulit mengatasi pembuktian palsu dan pengaruh militer selama proses peradilan berlangsung. Caetano Guterres yang akhirnya mendapat hukuman enam tahun, mengenang:

Pengacara disiapkan oleh mereka. Yang menjadi pengacara saya waktu itu adalah Merry yang berasal dari Kupang. Dia sangat baik dan membela aku mati-matian, karena para hakim memberikan ancaman hukuman penjara seumur hidup.⁵⁷

92. Cristiano da Costa, yang menolak memberi pengakuan dan dibebaskan setelah ditahan selama dua puluh bulan, berkata kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB tentang mereka yang tidak begitu beruntung:

Dua orang pengacara Indonesia dari Kupang ditunjuk oleh pengadilan untuk membela mereka, tapi mereka tidak memiliki kontak dengan para tahanan. Bahkan mereka bekerja erat dengan jaksa dan hakim, untuk menghasilkan putusan bersalah dan hukuman yang sudah ditentukan sebelumnya oleh militer.⁵⁸

93. Pernyataan yang diberikan pada Komisi, bahwa tertuduh tidak bebas memilih pembela mereka sendiri, bahwa mahkamah menunjuk pembela walaupun tertuduh menolak, dan bahwa pada umumnya para pembela itu bekerjasama dengan militer dan penuntut umum untuk memperkuat tuntutan alih-alih untuk mencabutnya, merupakan pembenaran terhadap fakta-fakta objektif yang diperoleh dengan memeriksa berkas-berkas mahkamah pengadilan. Dari 232 tahanan politik yang diadili antara 1983 sampai 1985, tidak seorang pun mempunyai alasan sebagai tidak bersalah atas tuntutan berat yang dikenakan pada mereka, dan tidak seorang pun dibebaskan dari tuntutan.

94. Pemeriksaan Komisi atas berkas-berkas tersebut menunjukkan bahwa pembelaan biasanya terbatas pada upaya mengajukan pengurangan hukuman. Artikel dalam *Far Eastern Economic Review* yang terbit saat itu menyatakan bahwa pihak jaksa hanya menceritakan tentang situasi seputar tindak kejahatan yang didakwakan, dan

pembela hanya mengusahakan peringanan hukuman.⁵⁹ Argumen-argumen yang didasarkan atas faktor-faktor yang meringankan diulang-ulang hampir kata per kata dalam semua pernyataan pembelaan. Para pengacara akan selalu berargumen bahwa terdakwa adalah orang yang sopan, jujur, menyesali perbuatannya, memiliki keluarga, dan tanpa catatan kejahatan sebelumnya.⁶⁰ Satu kasus pada 1985 tampak agak berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh majelis hakim dalam keputusan mereka, pembela berpendapat bahwa:

Setelah mempelajari keterangan saksi dan pernyataan terdakwa sendiri, telah ditetapkan secara yuridis bahwa terdakwa terbukti bersalah. Akan tetapi, ada persoalan non-yuridis yang mempengaruhi dan mendorong terdakwa untuk melakukan kejahatan, atau menjadi mudah dipengaruhi oleh GPK/Fretilin yang ditemui oleh terdakwa, seorang petani, ketika sedang mencari makanan di hutan.⁶¹

95. Faktor-faktor non-yuridis yang disebut termasuk tingkat pendidikan terdakwa yang rendah, yang berarti bahwa terdakwa tidak mampu memahami perbedaan antara kemerdekaan dalam propaganda GPK/Fretilin dan kemerdekaan bersama Indonesia; strata sosialnya yang rendah membuatnya mudah terpicat janji-janji muluk; dan adanya tekanan psikologis karena sering berhubungan dengan GPK.⁶² Pembelaan lain yang digunakan dalam beberapa kasus adalah bahwa terdakwa kecewa karena tidak dapat memperoleh pekerjaan atau janji-janji bantuan lain dari pemerintah.⁶³ Adapun David Dias Ximenes dikatakan merasa sakit hati karena gagal menapaki jenjang profesional dalam angkatan bersenjata Indonesia, walaupun ia merasa telah membuat pengorbanan pribadi yang besar.⁶⁴

96. Terdapat sedikit fleksibilitas dalam menjatuhkan hukuman. Mungkin ada negosiasi atas apa yang diajukan jaksa dalam daftar dakwaan, dan para terdakwa juga diberi kesempatan untuk menerima atau menolak hukuman. Caetano Guterres berkata bahwa awalnya ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, tetapi ditolaknya dengan alasan bahwa ia anak tunggal dan orangtuanya sudah tua. Kemudian hukuman tersebut dikurangi menjadi 15 tahun, lalu 10 tahun, dan akhirnya enam tahun. Bahkan Marito Reis, yang tidak didampingi pengacara, hukumannya berkurang dari 20 tahun ke 17 tahun (pada akhirnya menjalani 12 tahun).

Praduga tak bersalah

97. Seperti yang disebutkan di atas, pemeriksaan atas dokumen-dokumen pengadilan yang berkaitan dengan 232 kasus yang dipelajari oleh Komisi, menunjukkan tidak ada yang diputus bebas. Meskipun demikian, Laporan Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 1984 menyatakan bahwa selain mereka yang dijatuhi hukuman penjara pada tahun itu, “beberapa puluh orang yang lain diadili dan dibebaskan, sementara para jaksa membebaskan yang lain karena kurang bukti.”⁶⁵ Komisi tidak bisa mengidentifikasi vonis bebas satu pun dari investigasi yang dilakukan atas berkas dan catatan Pengadilan Negeri Dili yang terselamatkan. Karena itu, Komisi menyangsikan kebenaran materi yang ada di dalam Laporan Departemen

Luar Negeri Amerika Serikat, yang mungkin dikumpulkan tanpa mengacu ke catatan pengadilan. Komisi hanya menemukan bukti satu kasus dari November 1984 tentang Markus Assis yang didakwa melakukan pertemuan dengan komandan pasukan Railakan, di mana beberapa dakwaan digugurkan, tetapi dakwaan lain dilanjutkan. Para jaksa menggugurkan dakwaan primer karena tidak terbukti. Namun dakwaan subsider diproses dan Assis dijatuhi hukuman satu setengah bulan penjara.⁶⁶

98. Sebagai kelanjutan dari hasil pengadilan-pengadilan ini, terdapat indikasi lebih lanjut yang memperlihatkan bahwa praduga tak bersalah diabaikan. Seperti yang dicantumkan di atas, para tertuduh tidak diberitahu hak-hak mereka selama ditahan, termasuk hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP). Tidak ada hak untuk diam yang dijamin oleh KUHAP, tetapi KUHAP jelas menyusun elemen hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, hak atas praduga tak bersalah. Jaksa penuntutlah yang dibebani kewajiban pembuktian kesalahan, dan pembuktian kesalahan tidak dapat dilakukan dengan memaksa terdakwa mengakuinya.

99. Sebagian besar terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk menjalankan hak mereka untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian di pengadilan, karena mereka telah mengaku bersalah atas pelanggaran yang dituduhkan dalam BAP sebelum maju ke pengadilan. Banyak pengakuan yang dibuat di bawah tekanan atau ancaman.

100. Beberapa tanggapan publik yang dikeluarkan para hakim selama periode ini menunjukkan bahwa praduga tak bersalah tidak ditegakkan dalam pengadilan-pengadilan di Timor-Leste. Kepala Pengadilan Negeri Dili, Hakim LP Siregar, berbicara kepada seorang wartawan pada 1984 bahwa para terdakwa mengakui kesalahan mereka karena mereka jujur, dan karena alasan yang sama mereka tidak mengajukan banding: "Ketika hakim bertanya kepada mereka apakah dakwaan jaksa benar, mereka selalu menjawab: ya."⁶⁷ Artikel tersebut melanjutkan:

Apabila semua pengadilan dapat dilakukan dengan cara seperti pengadilan di Timor Timur, tugas profesi hukum menjadi mudah, katanya. Mereka yang hadir di hadapan meja hijau [yakni mereka yang diadili] semuanya jujur. Apabila mereka telah berbuat sesuatu, mereka siap mengakuinya. Dan mereka tidak pernah menyangkal apapun dalam pernyataan interogasi mereka, maka keseluruhan proses berjalan mulus.⁶⁸

101. Fakta-fakta ini membuat Amnesty International mengutarakan keprihatinannya pada Desember 1985, bahwa praduga tak bersalah tidak dijalankan dan ada tekanan atas para terdakwa untuk mengaku bersalah.⁶⁹

Kemandirian dan ketidakberpihakan pengadilan

102. Tidak ada hakim atau jaksa orang Timor-Leste selama pendudukan Indonesia atas Timor-Leste. Hakim-hakim dari mahkamah pengadilan Indonesia yang lain menjalankan tugas mereka secara bergiliran di Timor-Leste (biasanya selama beberapa tahun) dan kemudian dipindahkan ke tempat lain.

103. Para hakim Indonesia di Timor-Leste adalah pegawai negeri, dipekerjakan oleh Departemen Kehakiman, dan karena itu kurang independen. Putusan-putusan atas pengadilan-pengadilan tersebut adalah bukti nyata dukungan atas tujuan politik menekan gerakan kemerdekaan. Komisi yakin bahwa para hakim dalam kasus-kasus tersebut terlibat langsung atau tidak langsung dengan mereka yang memanipulasi proses pengadilan untuk tujuan politik yang diinginkan. Tidak ada satu pun kasus, dari 200 kasus yang ada, yang menyatakan terdakwa “tidak bersalah”, meskipun ada asas praduga tak bersalah. Hampir tidak ada penyelidikan yudisial atas bukti yang menunjukkan bahwa para saksi dan terdakwa mengalami penyiksaan dan penganiayaan dan bukti dimanipulasi. Seorang pengacara Indonesia yang bekerja di Timor pada 1990-an menyatakan bahwa faktor-faktor seperti penyuapan mungkin memengaruhi apakah dan bagaimanakah suatu kasus dibawa ke pengadilan.⁷⁰

104. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hakim mengontrol persidangan, berperan aktif mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Namun catatan pengadilan menunjukkan tentang pasifnya pengadilan dalam sidang peradilan politik ini, dan keengganan memeriksa tuntutan. Saat melaksanakan peran aktif mereka, para hakim cenderung menanyakan masalah-masalah yang bersifat politik, yaitu dengan menanyai sikap terdakwa tentang integrasi dan kemerdekaan, serta menanyakan: apakah terdakwa mengetahui bahwa secara hukum Timor-Leste merupakan bagian Indonesia, dan bahwa yang ia perbuat bertentangan dengan hukum Indonesia karena berusaha untuk memisahkan wilayah itu.

105. Para terdakwa dan pengacara mereka sama-sama menggambarkan pengadilan-pengadilan tersebut dijalankan di bawah kontrol militer, dengan para hakim yang tidak mampu menjalankan kemandirian apapun. Gubernur Timor Timur pada periode ini, Mário Carrascalão, menggambarkan pengadilan-pengadilan tersebut diatur militer.⁷¹ Menurut Marito Reis:

Mereka sendiri setelah vonis atau kami disidangkan, mereka datang ke Comarca. Mereka sambil bicara dengan kami, bahwa itu semua kami diatur oleh tentara sendiri bukan dari hak kami sendiri. Karena bapak-bapak ini sudah diatur oleh militer bahwa ini harus dihukum begini, ini begini, ini begitu, jadi sudah diatur oleh militer.⁷²

Hak naik banding

106. Dalam suratnya kepada Amnesty International pada 1984, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, menyatakan:

Setiap terdakwa berhak mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan kepada Pengadilan Tinggi dan hingga ke Mahkamah Agung. Sejauh ini belum ada seorang pun yang mengajukan banding tersebut, meskipun hak ini telah dijelaskan secara seksama oleh majelis hakim pada saat hukuman dijatuhkan.⁷³

107. Komisi tidak mengetahui pengajuan banding apapun yang berkaitan dengan 232 pengadilan yang dilaksanakan pada 1983-1985, yang dipelajari oleh Komisi.⁷⁴ Catatan pers saat itu sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Hakim Siregar. Pandangan ini benar-benar berlawanan dengan informasi yang diterima Komisi dari para terdakwa yang diadili dan dijatuhi hukuman:

Apabila mereka dijatuhi hukuman, mereka tidak pernah mengajukan banding, bahkan apabila pengacara mereka memaksa mereka melakukannya. Alasannya, ujar mereka, bahwa apapun yang dituduhkan adalah benar, dan mereka mengakui kesalahan mereka. Setelah hukuman dijatuhkan, para terpidana ini bahkan mengungkapkan rasa terimakasih mereka dan minta berfoto bersama!⁷⁵

108. Setelah dijatuhi hukuman, para terdakwa dipaksa menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa mereka menerima keputusan pengadilan dan tidak mengajukan banding. Beberapa di antara mereka, contohnya Marito Reis, berkata bahwa mereka menyetujui hal ini dan batal mengajukan banding karena mereka tidak percaya pengadilan-pengadilan tersebut sah dari sisi manapun. Acap kali para terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak naik banding karena adanya ancaman; karena apabila mereka tidak menerima putusan pengadilan, keluarga mereka akan dicelakakan, mereka akan terus disiksa dan ditahan dalam kondisi yang buruk, tidak bisa bertemu keluarga atau teman, serta tidak ada harapan akan dibebaskan:

*Jika kita tidak terima, kita tidak ketemu keluarga,, kita tetap berada dalam sel gelap, malam-malam tetap diancam sampai mati. Jika anda setuju, anda bebas.*⁷⁶

109. Amnesty International menyimpulkan, banyak terdakwa “tampaknya tidak memahami bahwa mereka berhak naik banding atas hukuman mereka, dan dalam beberapa kasus para terdakwa tersebut diberitahu bahwa apabila mereka tidak menerima vonis tanpa naik banding, hukuman ditambah.”⁷⁷

Kesimpulan

110. Menjelang 1983, orang-orang Timor-Leste yang dicurigai terlibat gerakan prokemerdekaan selalu serta-merta ditahan, disiksa, dan dibunuh (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan). Pada 1983, suatu kebijakan dibuat untuk menggunakan baik pengadilan maupun militer untuk melawan kaum penentang pendudukan.

111. Meskipun kebijakan ini dapat membawa perubahan dalam pendekatan pemerintah Indonesia terhadap pihak resistansi yang berdasar pada keadilan dan supremasi hukum, pada kenyataannya pendekatan tersebut dimanipulasi sehingga hanya ada sedikit keadilan. Pengadilan-pengadilan selama periode ini bukanlah kesempatan untuk memperoleh pengadilan yang adil di hadapan pembuat keputusan yang independen. Mereka hanyalah alat yang dimanipulasi untuk memastikan tercapainya tujuan politik.

112. Keadaan saat penahanan dan interogasi, perilaku saat tuntutan dan pembelaan dilaksanakan, dan putusan yang dijatuhkan adalah bagian dari strategi gabungan yang bertujuan untuk memberikan ilusi keadilan, sembari memastikan bahwa semua terdakwa akan terbukti bersalah melakukan pelanggaran politik.

113. Fakta-fakta yang berkaitan dengan pengadilan politik atas orang-orang Timor-Leste yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada 1983-1985, yang diperiksa oleh Komisi menghasilkan kesimpulan yang mengejutkan, yang mencerminkan sampai sejauh mana pengadilan-pengadilan tersebut adil dan sejalan dengan syarat-syarat proses peradilan sebagaimana mestinya. Komisi telah mempelajari 232 pengadilan politik, berikut ini hasilnya:

- 232 vonis terhadap dakwaan tuduhan berkaitan dengan makar dan subversi
- 232 terdakwa dibela oleh pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah
- 0 saksi yang meringankan diajukan ke pengadilan
- 0 catatan tentang kasus bebas dari semua tuduhan
- 0 catatan tentang banding atas hukuman yang dijatuhkan

114. Pengadilan-pengadilan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum internasional, tetapi juga pasal-pasal hukum Indonesia yang bisa diterapkan berkaitan dengan banyaknya permintaan yang paling mendasar untuk diselenggarakannya pengadilan yang adil. Hal tersebut meliputi:

- Orang dengan sewenang-wenang ditahan oleh militer hingga tujuh tahun sebelum diajukan ke pengadilan.
- Para anggota pasukan militer Indonesia secara sistematis menyiksa dan menganiaya tersangka untuk memperoleh pengakuan palsu dan mendapatkan informasi.
- Para terdakwa tidak diberitahu akan hak mendapat pengacara, atau pengacara yang mereka pilih tidak diberi kesempatan hadir selama persidangan.
- Pemerintah menunjuk pengacara yang membela ratusan orang yang didakwa dengan dakwaan sama dalam banyak kasus yang berkaitan dengan fakta sama, menyebabkan konflik kepentingan yang tajam. Para pengacara gagal membela klien mereka sepenuhnya. Mereka tidak mempermasalahkan penahanan yang sewenang-wenang atau penyiksaan fisik selama proses peradilan, secara umum bersikap pasif, tidak mengajukan saksi untuk mendukung pembelaan, dan sering menyetujui pernyataan yang dibuat kejaksaan.
- Para hakim bersikap memihak dan tidak independen. Mereka turut serta dalam, atau setuju saja dengan, manipulasi proses pengadilan untuk memastikan putusan bersalah bagi semua terdakwa
- Karena intimidasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan para anggota pasukan keamanan Indonesia, anggota masyarakat tidak bebas mengikuti persidangan.

- Vonis yang dijatuhkan berkisar antara lima hingga tujuh tahun. Saat menjatuhkan hukuman para hakim tidak memperhitungkan saat-saat sebelum penahanan militer, yang dalam beberapa kasus saat-saat penahanan tersebut bisa mencapai tujuh tahun.

Pengadilan Santa Cruz: 1992

115. Pembantaian di perkuburan Santa Cruz pada 12 November 1991 memicu amarah dunia internasional, sebagian besar disebabkan oleh gambar-gambar film yang berhasil diselundupkan ke luar negeri, yang memperlihatkan para tentara menembaki warga sipil tidak bersenjata. Sebagai tanggapan, pemerintah Indonesia melangsungkan beberapa penyelidikan mengenai kejadian tersebut. Sebuah penyelidikan internal militer dilaksanakan dan Komisi Penyelidik Nasional dibentuk. Dewan Kehormatan Militer mendengarkan tuduhan pelanggaran prosedur terhadap enam orang perwira senior. Sepuluh orang perwira rendahan menghadapi pengadilan militer.

116. Walaupun demikian, tanggapan terbesar dari pemerintah Indonesia tidak difokuskan pada pendisiplinan para pewira militer yang bertanggung jawab atas penembakan ratusan demonstran tidak bersenjata dan telah menewaskan banyak orang, melainkan difokuskan pada penyidikan dan penangkapan orang Timor-Leste yang mengorganisasi demonstrasi yang membawa para pengunjung rasa ke perkuburan Santa Cruz.

117. Setelah Komisi Penyelidik Nasional menyerahkan laporan awal mereka, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Jaksa Agung untuk mengambil semua langkah yang dianggap perlu terhadap mereka yang merencanakan dan mengambil bagian dalam kerusuhan tersebut.⁷⁸ Yang kemudian terjadi ialah pengadilan terhadap delapan orang, dua dari mereka didakwa melakukan tindak subversif, dan yang lainnya dengan perbuatan makar. Secara keseluruhan dilaksanakan duabelas sidang pengadilan, dimulai dari 12 Maret 1992, dengan sebelas persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Dili dan satu di Pengadilan Negeri Baucau.

118. Bagian berikut ini membahas pengadilan Gregório da Cunha Saldanha, Francisco Miranda Branco, Jacinto das Neves Raimundo Alves, Carlos dos Santos Lemos, Juvencio de Jesus Martins, Bonafacio Magno, dan Filomeno da Silva Ferreira. Analisis ini didasarkan pada berkas perkara dari Pengadilan Negeri Dili, pernyataan para saksi, sumber-sumber sekunder, dan wawancara-wawancara yang dilakukan oleh Komisi. Untuk kepentingan Laporan ini, Komisi berfokus pada pengadilan-pengadilan utama, yakni pengadilan atas Francisco Branco dan Gregório Saldanha, walaupun penelitian dan analisis terhadap pengadilan-pengadilan lainnya juga dilakukan dan disebut dalam tulisan ini apabila relevan. Analisis atas proses peradilan yang berhubungan dengan insiden Santa Cruz didasarkan pada materi-materi yang berhubungan dengan semua pengadilan.

Ulasan Fakta

Latar belakang

119. Pada akhir 1991 sebuah delegasi pemerintah Portugis berencana mengadakan kunjungan ke Timor-Leste. Para aktivis prokemerdekaan dan Hak Asasi Manusia berniat memanfaatkan kunjungan tersebut sebagai kesempatan untuk memberitahukan kepada dunia tentang pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran yang dilakukan terhadap rakyat Timor-Leste.

120. Komite Eksekutif jaringan perlawanan, Dewan Perlawanan Nasional Maubere (CNRM), menyebarkan informasi politik tentang kunjungan tersebut dan berencana menyerahkan sebuah petisi kepada delegasi.⁷⁹ Hampir semua terdakwa kasus Santa Cruz, kecuali satu orang, adalah anggota Komite Eksekutif tersebut.

121. Pada masa-masa menjelang rencana kunjungan delegasi Portugis, terjadi peningkatan aktivitas politik anti-pemerintah. Militer Indonesia merespons aktivitas tersebut dengan mencari, menangkap, dan memenjarakan semakin banyak pemuda di Dili selama Oktober dan November 1991. Sebagai akibatnya, sekitar 20 orang aktivis bersembunyi di dalam Gereja Motael di Dili.

122. Anggota militer Indonesia menjawab dengan kekerasan terhadap orang-orang yang mencari perlindungan di gereja tersebut, dan dalam sebuah bentrokan dengan para aktivis pada 28 Oktober 1991, salah seorang pemuda Timor-Leste, Sebastião Gomes Rangel, terbunuh.⁸⁰ Afonso Henriques, seorang agen intelijen, dilaporkan mengalami luka fatal akibat benda tajam.⁸¹

123. Lima orang Timor-Leste diadili dan didakwa atas tindakan kekerasan yang berujung pada kematian Afonso Henriques. Tidak ada tindakan resmi yang diambil terhadap anggota pasukan keamanan yang terlibat dalam pembunuhan Sebastião Gomes Rangel.

124. Komite Eksekutif Resistansi merencanakan sebuah demonstrasi damai untuk menarik perhatian kepada pembunuhan Sebastião dua minggu setelah kematiannya. Juga direncanakan sebuah prosesi dari Gereja Motael menuju perkuburan Santa Cruz, di mana ia dimakamkan.

Temuan fakta sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan selama sidang

125. Berikut adalah rangkuman singkat dari fakta-fakta pembantaian Santa Cruz sebagaimana yang ditetapkan pada saat sidang: Perencanaan untuk demonstrasi Santa Cruz dimulai pada 8 November 1991, dan persiapannya mencakup pembuatan

* Untuk keterangan lebih lanjut lihat Amnesty International, "Indonesia/East Timor: In Accordance with the Law: Statement to the United Nations Special Committee on Decolonization", Juli 1992. Para terdakwa di pengadilan Motael masing-masing menerima hukuman berikut ini: Aleizo da Silva Gama 2 tahun 3 bulan; Bobby Xavier 3 tahun; Jacob da Silva 2 tahun; Joao dos Santos 1 tahun 8 bulan; dan Bonifacio Barreto 1 tahun 8 bulan.

spanduk-spanduk prokemerdekaan serta penentuan rute yang akan dilalui oleh demonstrasi tersebut. Pada pagi hari tanggal 12 November 1991, sebuah prosesi yang dipimpin oleh Gregório Saldanha berangkat meninggalkan Gereja Motael. Lagu-lagu prokemerdekaan dinyanyikan sepanjang jalan dan para peserta mengusung spanduk-spanduk prokemerdekaan.

126. Mayor Andi Gerhan Lantara dan Pratu Domingos da Costa diserang oleh para demonstran dalam perjalanan menuju perkuburan Santa Cruz. Kutipan dari rincian keputusan atas Gregório da Cunha Saidanha menjelaskan versi pengadilan tentang apa yang terjadi kemudian di perkuburan:

Kemudian terdengar suara tembakan dari arah demonstran, dan kemudian petugas keamanan mengeluarkan tembakan peringatan, namun dari arah demonstran ada suara: “Maju. Serbu”, yang diikuti para demonstran menyerang petugas keamanan, sehingga terjadi kerusuhan antara demonstran dengan petugas keamanan, yang diikuti tembakan dari petugas keamanan; para perusuh menyatakan, korban jatuh di pihak para demonstran.⁸²

127. Kutipan di atas merupakan pembahasan satu-satunya dari pihak pengadilan tentang apa yang terjadi di perkuburan Santa Cruz. Fakta-fakta yang disampaikan pada sidang berfokus pada pertemuan-pertemuan klandestin dan persiapan-persiapan sebelum demonstrasi. Pembunuhan-pembunuhan di perkuburan, dan khususnya tindakan tentara Indonesia, tidak dijelaskan.

128. Walaupun demikian, kenyataan bahwa demonstrasi tersebut memang meningkatkan ketegangan, dan karenanya menjadi alasan pembenaran atas pembantaian yang terjadi setelahnya, menjadi pokok bahasan di depan pengadilan. Untuk memberi pembenaran pada pendapat ini, pernyataan resmi Brigadir Jenderal Theo Syafei, Komandan Kolakops (Komando Pelaksana Operasi) di Timor-Leste, yang ditulis pada 31 Januari 1991 dan pernyataan Drs A.B. Saridjo, Wakil Gubernur Timor Timur, ditulis pada 25 Februari 1992, digunakan sebagai sandaran. Isi dua pernyataan tersebut tepat sama, yakni:

Bahwa demonstrasi pada 12 November 1991 di kota Dili itu telah berakibat:

- a. merusak atau merongrong kekuasaan Negara atau kewibawaan Pemerintah yang sah atau perangkat Negara;
- b. rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, keguncangan, atau kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas.⁸³

Fakta-fakta berdasarkan sumber-sumber independen

129. Setelah materi yang diajukan oleh pejabat pemerintah Indonesia dan saksi-saksi independen dipertimbangkan dengan hati-hati, Komisi beranggapan bahwa laporan-laporan berikut tentang apa yang sebenarnya terjadi lebih dapat dipercaya

dibandingkan dengan apa yang diterima di pengadilan: Sekitar 3.000 – 4.000 orang, umumnya pelajar, mengambil bagian dalam demonstrasi yang dimulai di Gereja Motael sampai ke perkuburan Santa Cruz.⁸⁴ Prosesi tersebut secara umum berjalan dengan damai, dengan para demonstran mengusung spanduk-spanduk prokemerdekaan dan meneriakkan yel-yel prokemerdekaan sepanjang perjalanan. Kira-kira 1 km dari area perkuburan, seorang mayor dan seorang pratu berpakaian sipil dilukai oleh para demonstran.⁸⁵ Sekitar lima atau sepuluh menit setelah para demonstran sampai di perkuburan Santa Cruz, ratusan tentara bersenjata senjata otomatis M-16 tiba.⁸⁶ Saksimata melaporkan bahwa para tentara berbaris di depan gerbang perkuburan tersebut dan melakukan penembakan tanpa peringatan atau provokasi. Penembakan tersebut dilaporkan berlangsung selama 10 sampai 15 menit. Perkiraan independen menunjukkan jumlah korban mencapai 271 orang. [Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, untuk analisis perkiraan jumlah korban mati dalam pembantaian ini.]

Penangkapan

130. Segera setelah pembantaian tersebut, pasukan keamanan Indonesia langsung menangkapi mereka yang dicurigai terlibat dalam demonstrasi tersebut. Komisi menemukan bahwa pada 13 November 1991, 308 orang ditangkap dan 49 dari mereka ditahan. Dari mereka yang ditahan dan ditangkap, 259 kemudian dilepaskan. Walaupun demikian, menurut pemerintah Indonesia, sampai dengan Januari 1992 hanya 32 orang yang ditahan di Dili sehubungan dengan peristiwa tersebut.⁸⁷ Setelah tertembak dan terluka di kawasan perkuburan, Gregório Saldanha kemudian dibawa ke tahanan dari rumah sakit militer:

Pada hari kedua saya dikunjungi oleh anggota militer Indonesia bernama Kapten Made dari Kopassus. Dia tanya sama saya 'Kamu Gregório?' Saya jawab 'ya'. Dia bilang 'kita sudah lama cari kamu.' Dia lalu melihat foto saya. Besoknya dua lagi tentara Indonesia datang menjenguk saya. Mereka juga dari Kopassus. Satu bernama Letnan Eddy. Dia periksa saya dan mau tahu nama organisator demonstrasi. Saya bilang saya yang organisir.⁸⁸

131. Para agen intelijen mengungkap nama-nama para organisator lain dari demonstrasi tersebut, kemudian mengeluarkan surat panggilan bagi para organisator tersebut untuk menghadap ke Polwil. Sebagian dari orang-orang yang dipanggil ini menjadi saksi dalam penyelidikan kasus Gregório Saldanha.⁸⁹ Sejak saat itu, para terdakwa secara resmi ditahan sebagai tersangka, sebagian diizinkan pulang ke rumah dengan syarat wajib lapor ke Polwil setiap hari. Dalam periode tersebut mereka menjadi sasaran interogasi yang gencar. Francisco Miranda Branco menceritakan apa yang terjadi:

Waktu itu setelah tragedi 12 November, aparat militer menangkap banyak orang untuk diinterogasi. Pada proses investigasi mereka

akhirnya mengetahui nama-nama kita...dalam proses interogasi itulah aparat kepolisian mempunyai kesimpulan bahwa peristiwa 12 November bukanlah terjadi secara spontan, tetapi telah terorganisir dan direncanakan sebelumnya.⁹⁰

Kita sudah dicurigai sehingga diwajibkan setiap hari lapor ke Polwil, sampai mereka tahu bahwa kita adalah orang-orang yang mencurigakan, karena mereka sudah mempunyai informasi, tetapi belum ada bukti, sehingga selama kita diwajibkan untuk melaporkan diri, waktu itu, mereka melakukan konfirmasi bahwa kita adalah anggota Komisi Eksekutif, “Komisaun Eksekutivu,” sehingga setelah mereka mendapat konfirmasi bahwa kita adalah anggota organisasi ini sehingga kita ditahan.⁹¹

132. Sebuah surat perintah penangkapan yang tampaknya resmi dikeluarkan oleh polisi untuk para terdakwa pada akhir Desember 1991. Perintah penahanan dan kelanjutannya tampaknya telah dikeluarkan sehubungan dengan prosedur tersebut.

133. Prosedur penangkapan bagi semua terdakwa secara umum mirip, dengan pengecualian Bonifacio Magno. Ia ditangkap larut malam pada 11 November 1991, sekitar tengah malam, sebelum terjadinya pembantaian. Ia dilepaskan pada pukul 06.00 namun tidak bisa meninggalkan rumahnya yang telah dikelung oleh tentara. Bonafacio Magno kemudian ditahan lagi sekitar satu jam setelah pembantaian terjadi.⁹²

Prasidang

Kondisi di Polda Comoro*

134. Setelah kira-kira satu minggu di Polwil, pada awal Desember 1991, para terdakwa dipindahkan ke Polda Comoro, Dili. Mereka tetap berada di Polda sampai sidang selesai. Di sini kondisi para tahanan tidak memenuhi standar yang layak. Misalnya sel yang terlalu penuh, kebersihan yang buruk, dan makanan yang di bawah standar. Francisco Miranda Branco menggambarkan situasi tersebut:

Kalau bicara lingkungan, itu memang tidak manusiawi, ada teman-teman yang tidur di ruangan, itu sebetulnya ruangan untuk berolahraga, tidak ada alas; saya dan teman-teman lain, mereka mencurigai bahwa kita akan melarikan diri, sehingga kita dikurung dalam ruangan yang tertutup, tapi dalam kondisi itu tidak manusiawi.⁹³

135. Beberapa terdakwa menyatakan bahwa penyiksaan secara fisik juga dilakukan. Dalam sebuah pernyataan kepada Unit Kejahatan Berat (Serious Crime Unit, SCU), Bonifacio Magno berkata: “Saya disiksa dengan kejam oleh polisi yang namanya saya

* Para tertuduh sebelum diadili ditahan di Comarca Balide, Penjara Becora, dan Penjara Semarang.

tidak tahu.”⁹⁴ Gregório Saldanha, juga dalam pernyataannya kepada Unit Kejahatan Berat, berkata: “Saya juga dipukuli berkali-kali oleh Sersan PT2, dan seorang lagi yang namanya saya tidak ingat.”⁹⁵

136. Walaupun demikian, tampaknya siksaan fisik terhadap para tahanan yang tersangkut peristiwa demonstrasi Santa Cruz, yang pada akhirnya diadili, tidak banyak terjadi.* Namun tindakan-tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan tekanan psikologis, ancaman kepada anggota keluarga, serta intimidasi digunakan untuk mengorek informasi. Menurut Francisco Miranda Branco penyiksaan fisik relatif tidak banyak terjadi karena adanya pengawasan dunia internasional atas pembantaian Santa Cruz:

*Pada waktu itu saya tidak mengalami penyiksaan. Karena mereka tahu bahwa peristiwa Santa Cruz merupakan peristiwa yang telah diketahui oleh dunia internasional, sehingga mata dunia pada saat itu tertuju ke Timor-Leste.*⁹⁶

137. Sementara di Polda, para terdakwa menjalani saat-saat interogasi yang terus-menerus dan merusak secara psikologis. Hal tersebut terjadi tanpa kehadiran pengacara, di mana hak untuk pengacara dijamin berdasarkan Pasal 54 KUHP.

138. Praktik yang umum dilakukan aparat Indonesia adalah melakukan interogasi ketika para tahanan kurang tidur:

*Seperti mereka katakan bahwa tahanan tidak perlu tidur di atas tikar, tanpa alas, begitu itulah cara mereka. Kadang-kadang mereka menginterogasi berjam-jam, bahkan satu hari penuh atau bisa 24 jam, ini tidak memenuhi standar internasional.*⁹⁷

*Mereka mulai interogasi dari jam 7 pagi...dan berakhir sampai jam 12 malam, jam 1 atau jam 2 pagi; ia ini baru berakhir dan suruh kita tidur. Jam 7 pagi pintu sudah mulai buka lagi dipanggil untuk interogasi lagi. Setiap hari memang rutin dan waktu untuk istirahat untuk seorang tahanan memang tidak ada.*⁹⁸

139. Jacinto Alves menceritakan bagaimana keluarganya diintimidasi dan diganggu ketika ia ditahan:

*Selama sidang, ada ancaman dari polisi? Tidak, tapi [ada ancaman] terhadap keluarga saya.*⁹⁹

* Tahanan lain yang akhirnya tidak diadili, diberitakan mengalami pemukulan dan penyiksaan. Lihat Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Penganiayaan.

Investigasi

140. Investigasi yang dilakukan memadukan tiga pendekatan yang berbeda: pencarian informasi, pencarian pengakuan, dan pemalsuan bukti-bukti.

Pencarian informasi

141. Strategi inti dari investigasi oleh penguasa Indonesia terdiri atas interogasi terus-menerus terhadap para tersangka oleh para penyidik, penuntut, dan berbagai anggota pasukan keamanan, termasuk Kopassus. Francisco Branco ingat benar telah diinterogasi oleh anggota grup intelijen BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) dari Jakarta, yang menggunakan taktik intimidasi untuk mendapatkan informasi:

Sekelompok perwira intel dari BAKIN, Jakarta, ditugasi khusus untuk memeriksa saya.¹⁰⁰

Seperti taruh pistolnya di atas meja dan memperlihatkan pistolnya di pinggang; dan bukan hanya satu orang yang melakukan interogasi, tetapi 1-4 orang yang melakukan interogasi bersama-sama...berjam-jam.¹⁰¹

142. Perlu dicatat bahwa KUHAP tidak menyediakan dasar hukum untuk interogasi terdakwa oleh agen intelijen atau anggota pasukan keamanan lainnya. Jacinto Alves lebih jauh menjelaskan tentang keadaan yang menegangkan pada saat interogasi:

Ada lima atau enam interogator sekaligus, yang itu bertanya yang satu bertanya belum kita jawab, yang dua langsung bertanya lagi; dan itu hanya cara untuk membuat kita pusing dan stres; dan saya berpikir, interogasi-interogasi setiap hari dan berlangsung dari bulan November, Desember, Januari, Februari itu waktu yang cukup lama sekali sampai Maret dan April.¹⁰²

143. Teknik-teknik investigasi yang kasar ini menghasilkan pernyataan-pernyataan yang tidak benar dalam berita acara pemeriksaan. Gregório Saldanha menceritakan hal ini sehubungan dengan apa yang muncul pada BAP-nya:

Ada yang betul itu saya katakan dengan ikhlas, yang tidak betul kalau saya dipaksa untuk menyatakan, cuman saya berusaha untuk menyatakan hal-hal yang kadang-kadang tidak usah saya katakan supaya memfasilitasi saya berjalan mulus, dan ada yang saya membohongi untuk menutupi, biar tidak merusak dengan orang-orang yang di luar, biar jaringan di luar kita tidak putus.¹⁰³

144. Intimidasi dan penyiksaan psikologis tidak hanya digunakan untuk menciptakan bukti-bukti palsu dengan menggunakan kata-kata para terdakwa, melainkan juga dipakai untuk membuat keterangan palsu oleh para saksi yang digunakan untuk memberatkan para terdakwa dalam persidangan mereka.

145. Dalam sidang Gregório Saldanha, seorang saksi, Augusto Fulipe Gama Xavier alias Teky, memberitahukan pada pengadilan, tentang bagaimana ia mendapatkan barang buktinya yang memberatkan terdakwa.

Hakim Anggota I: Apakah benar semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan itu?

Saksi V: Pada umumnya benar, namun ada beberapa keterangan yang sebenarnya saya tidak tahu samasekali, tapi dipaksa/dibujuk oleh pemeriksa. Katanya: "Bantu saya (pemeriksa) supaya semua perbuatan dan tindakan terdakwa ini benar semuanya, sehingga pemeriksaan ini cepat selesai."¹⁰⁴

146. Dalam sidang yang sama, pemukulan para saksi pada masa penyidikan sempat dituduhkan dalam pernyataan penutup dari pembela:

Keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat Penyidik telah diberikan dalam keadaan yang tidak bebas karena adanya tekanan dan pemukulan terhadap saksi-saksi tersebut.¹⁰⁵

Cara-cara tidak sah dalam mendapatkan pengakuan

147. Menurut Pasal 45 KUHAP, tersangka berhak didampingi pengacara pada saat interogasi; sementara itu, ketentuan demikian ini tidak ada untuk saksi. Hal ini sesuai dengan hak dasar setiap orang untuk tidak dipaksa memberatkan diri mereka.

148. Sebuah metode yang digunakan oleh penguasa Indonesia terhadap para terdakwa Santa Cruz ialah dengan memeriksa mereka sebagai saksi dalam kasus rekan-rekannya sesama terdakwa, misalnya tentang struktur dan strategi jaringan klandestin. Bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan tersebut akan digunakan untuk memberatkan mereka dalam sidang mereka sendiri. Dengan berpura-pura bahwa si terdakwa adalah saksi, tanpa menghiraukan bahwa ia hendak disidang secara tersendiri, penguasa Indonesia bermaksud untuk secara tidak sah membelokkan pasal-pasal dalam hukum pidana Indonesia dan ketentuan-ketentuan hak-hak asasi manusia yang sudah diterima secara umum. Faktanya ialah bahwa mereka yang sedang diperiksa berstatus sebagai terdakwa. Oleh karena itu, mereka berhak untuk hanya diperiksa dengan kehadiran penasihat hukum.

149. Para penasihat hukum tidak hadir dalam interogasi para saksi ini. Sebagai contoh, enam dari delapan terdakwa diperiksa sebagai saksi memberatkan dalam kasus Francisco Branco. Hal ini sesuai dengan laporan Amnesty International pada saat itu, yang menyatakan bahwa beberapa terdakwa dipaksa menandatangani pernyataan yang sebenarnya menjadi pengakuan, tanpa memperoleh saran dari seorang penasihat hukum atau tanpa kehadiran pengacara yang dapat membantu menghindari kemungkinan terjadinya tekanan, pemaksaan, atau intimidasi yang berkenaan dengan pengakuan.¹⁰⁶

Pemalsuan barang bukti

150. Ada banyak cerita bahwa pihak penyidik berusaha mengambil pernyataan yang tidak benar dan memalsukan barang bukti. Jacinto Alves menggambarkan bagaimana teknik tersebut digunakan untuk memaksa tersangka menandatangani pernyataan:

Ada saat di mana kita tidak setuju mereka tulis di dalam pemeriksaan; dan saya, umpamanya, sering menolak untuk tandatangan surat pemeriksaan, dan di sana biasanya mereka, kalau mereka angkat baju dan majukan pistol di dalam atau menarik laci untuk menunjukkan pistol di dalam.¹⁰⁷

151. Gregório Saldanha dikutip oleh Amnesty International telah memberikan nama-nama yang salah karena ditekan oleh para interogator:

Karena saya sudah tidak tahan perlakuan biadab ini, dan karena saya sudah lemah oleh luka tembak, saya kasih nama pejabat tinggi, pastor, dan pengusaha yang tidak tahu apa-apa dan tidak ada hubungan sama saya, seperti ungkapan “yang penting boss senang”.¹⁰⁸

152. Salah satu contoh teknik interogasi yang tidak sah adalah pemalsuan barang bukti. Jacinto Alves menceritakan bagaimana Gregório dipaksa untuk “memilih” senjatanya—sebagai sebuah barang bukti—di depan seorang hakim:

Terus mereka mencoba merekayasa peristiwa 12 November. Mereka itu [perwira polisi dan intel] bilang, demonstran menggunakan senjata. Ini ada satu peti besi senjata yang cukup panjang, di dalamnya ada mungkin banyak senjata yang bermerek Get-min dan Mauser. Ada yang sudah berkarat seperti karena sudah lama tidak pakai. Itu ada Polisi, Intel, dan mereka bilang: “Ayo kita pergi periksa senjata yang dipakai oleh demonstran”. Cara mereka bertanya begini, “Ayo coba kamu pilih, senjata mana yang dipakai di sana?” Anehnya sandiwara semacam itu disaksikan oleh para hakim dan mereka percaya. Sampai ada pemeriksaan di pengadilan barang bukti itu pemeriksaan senjata ada yang ikut, sehingga hakim itu percaya.¹⁰⁹

153. Jacinto Alves memberi dua contoh lainnya tentang pemalsuan barang bukti:

Mereka ambil beberapa foto di dalam demonstran Santa Cruz. Foto itu ada kayu, orang pakai spanduk, kita disuruh, anda mengakui bahwa itu bukan kayu tapi senjata. Atau mereka datang ke rumah anda, seperti yang terjadi pada Saturnino dari Baucau, mereka mengambil pisau dan parang di dapur, disita, dan dijadikan sebagai barang bukti.¹¹⁰

Akses terhadap pengacara

154. Dalam masa pra-sidang, para terdakwa dihalang-halangi untuk memilih penasihat hukumnya sendiri dan akibatnya dipaksa menerima pengacara yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia. Para terdakwa kemudian diwakili sejak awal oleh Ponco Atmono, seorang pengacara Indonesia yang berbasis di Dili.^{*} Surat-surat yang ditandatangani oleh para terdakwa pada Desember 1991 dapat ditemukan dalam berkas-berkas pengadilan di mana dinyatakan bahwa para terdakwa melimpahkan wewenang sah kepada Ponco Atmono untuk bertindak atas nama mereka.

155. Namun tampaknya sebagian terdakwa tidak ingin diwakili oleh Ponco Atmono, dan mungkin telah dipaksa menandatangani surat-surat tersebut. Dengan demikian, Ponco Atmono memang ditunjuk oleh pihak penguasa Indonesia sebagai penasihat bagi para terdakwa di luar kemauan mereka. Hal tersebut dengan jelas merupakan pelanggaran pasal 54 dan 55 dari KUHAP,[†] yang memberi hak bagi para terdakwa untuk diwakili oleh pengacara yang mereka pilih sendiri dari tahap awal penyelidikan.[‡] Masa penyelidikan merupakan saat-saat yang sangat penting di mana perlu ada pendampingan pengacara independen untuk melindungi hak-hak dan kepentingan tersangka. Tanpa adanya pengacara independen, para tersangka dapat dipaksa menandatangani berbagai pernyataan serta bukti-bukti dapat dipalsukan, seperti yang terjadi dalam sidang pengadilan Santa Cruz.

Dari awal Gregório da Cunha tidak menerima Ponco Atmono sebagai penasihat hukumnya, dan merasa tidak senang karena tidak bisa memilih pengacaranya sendiri yang independen:

Dia selalu berperan sebagai pengacara. Tidak. Bukan seperti pengacara yang kita pilih, jadi sesuai dengan aparat. Biasanya dia tidak tampak kalau pemeriksaan, padahal seperti pengacara kita yang lain, seharusnya ia mendampingi kita pada saat kita pemeriksaan, walaupun tidak didampingi tapi paling tidak membela.¹¹¹

* Dalam sidang, Francisco Branco dan Gregorio Saldanha diwakili oleh tim yang merupakan kerjasama YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia). Tim tersebut dipimpin oleh Luhut M.P. Pangaribuan dan Artidjo Alkostar. Juvenco Martins dan Filomeno Perreira diwakili dalam sidang oleh Nur Ismanto dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Carlos Lemos dan Bonafacio Magno diwakili oleh Ponco Atmono dari awal sampai akhir sidang mereka.

† Pasal 54 KUHAP: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Pasal 55 KUHAP: "...tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya".

‡ Pasal 56(1) KUHAP mengharuskan agar pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan untuk "menunjuk penasihat hukum dalam kejahatan yang diancam hukuman mati atau hukuman penjara lebih dari 15 tahun, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahunan atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri." Hal tersebut dijadikan alasan pembenaran atas ditunjuknya Ponco Atmono karena tidak ada pengacara lain pada saat Ponco Atmono ditunjuk. Namun pasal tersebut tidak mengakui tekanan yang diberikan pada terdakwa, dan bertentangan dengan maksud Pasal 56 (1) yang hendak menegaskan bahwa mereka yang menghadapi kasus berat padahal tidak mendapat perwakilan hukum, maka mereka mendapatkan pengacara yang ditunjuk untuk kasus mereka.

156. Beberapa terdakwa yang tidak puas diwakili oleh pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah meminta anggota keluarganya untuk menghubungi pengacara-pengacara dari lembaga bantuan hukum. Menurut Francisco Branco:

Kita dipaksa untuk memilih seorang pengacara dari pemerintah, tetapi saya tetap bersikeras tidak mau menerima, namanya Ponco; dan saya kontak dengan keluarga memilih satu tim yang betul-betul independen, yang bisa menangani kasus yang besar, mereka dari LBH Jakarta, tapi waktu itu dihalangi oleh Intel dan Hakim, Intel meneror mereka dan hakim sudah dibisiki BAKIN agar mereka ditolak.¹¹²

157. Seperti telah disebut terdahulu pada bab ini, catatan interogasi dari terdakwa selalu dipalsukan. Terdapat kontradiksi langsung antara kata-kata Francisco Branco tersebut di atas, yang menyatakan bahwa ia tidak setuju pada pengacara yang ditunjuk oleh mahkamah pengadilan, dan catatan interogasinya menyatakan sebagai berikut:

Penyidik: "Apakah dalam pemeriksaan ini saudara perlu didampingi penasihat hukum?"

Francisco Branco: "Pemeriksaan hari ini tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi nanti di pengadilan mungkin saya perlu didampingi penasihat hukum."¹¹³

158. Hasil dari keberatan yang diajukan para terdakwa mengenai dipaksakannya pengacara untuk mereka, sebuah tim pengacara dari YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) datang dari Jakarta untuk membela para terdakwa utama. Pada saat dimulainya sidang pertama (yakni terhadap Francisco Miranda Branco), Luhut M.P. Pangaribuan, seorang pengacara dari YLBHI, tampil di depan Pengadilan tetapi tidak mendapat izin membela terdakwa. Menurut hakim ketua:

Apabila Pengacara dari Jakarta atau tempat lain melakukan pembelaan perkara di tempat lain, syaratnya ia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Tinggi dalam wilayah hukum mana Pengacara itu akan melakukan pembelaan.¹¹⁴

159. Menurut YLBHI para pengacara yang dikirim telah diizinkan melakukan praktik hukum di semua provinsi Indonesia, termasuk Timor Timur. Walaupun tim pembela juga telah mengirimkan surat permohonan kepada Pengadilan Tinggi Kupang dua hari sebelum sidang dimulai, dan belum sempat menerima jawaban, mereka tidak juga diberi izin bertindak. Oleh karena itu hakim kembali menunjuk Ponco Atmono untuk membela terdakwa di pengadilan. *Buletin YLBHI* yang diterbitkan pada sekitar waktu itu merangkum apa yang telah terjadi:

Semua pengacara di tim penasihat hukum adalah advokat senior sehingga mengizinkan mereka untuk berpraktik di propinsi mana pun di

Indonesia. Walaupun sudah ada legitimasi tim penasihat hukum untuk membela delapan warga Timor Timur yang didakwa dengan subversi di Pengadilan Negeri Dili, hakim di Dili menyatakan bahwa tim YLBHI-IKADIN tidak memiliki wewenang karena kegagalan prosedur mereka untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Tinggi Propinsi-Propinsi Timur di Kupang, Timor Barat untuk berpraktik di Dili... Hakim di Dili menolak untuk mengizinkan tim membela para terdakwa atas dasar kecacatan prosedur dan menunjuk seorang pengacara di Dili... untuk membela para terdakwa. Menurut KUHAP, terdakwa memiliki hak untuk memilih penasihat hukumnya. Namun karena hakim di Dili menolak mengizinkan tim YLBHI-IKADIN untuk berpraktik, hakim menyatakan bahwa pengacara pengganti harus ditunjuk, baik dengan atau tanpa persetujuan terdakwa terhadap pengacara tersebut... Sebagai protes atas keputusan hakim yang telah melanggar hak para terdakwa, Direktur YLBHI memohon agar Mahkamah Agung Indonesia mengoreksi kesalahan hakim Dili. Mahkamah Agung menerima permohonan YLBHI dan mengirim telegram kepada hakim Pengadilan Negeri Dili yang menginstruksikan untuk menghormati tim pengacara YLBHI-IKADIN dan mengizinkan mereka untuk membela para terdakwa di Pengadilan Tinggi Dili, Timor Timur.¹¹⁵

160. Telegram yang dimaksud dibacakan pada saat sidang:

Penolakan majelis Pengadilan Negeri Dili terhadap para pengacara dari Jakarta untuk mewakili terdakwa: Fransisco Miranda Branco di Pengadilan Negeri Dili; yang isinya antara lain, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dili mencabut kembali penetapan penunjukan Penasihat Hukum yang telah ditetapkan dalam perkara terdakwa ini.¹¹⁶

161. Intervensi Mahkamah Agung dengan mengirimkan telegram tersebut sangat berperan dalam memastikan bahwa sebagian dari para terdakwa menerima bantuan hukum independen.¹¹⁷ Telegram Mahkamah Agung ini sebagai hasil dari lobi-lobi gencar oleh YLBHI kepada pihak-pihak di Mahkamah Agung untuk menggugah kesadaran mereka bahwa apa yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang mengatur pengadilan dan hak-hak para terdakwa.

162. Amnesty International melaporkan bahwa keluarga para terdakwa merasa ditekan oleh penguasa Indonesia agar menarik kembali permintaan mereka untuk mendapat penasihat hukum independen, dan pengacara dari lembaga bantuan hukum mendapat pengawasan ketat dari para pejabat intelijen sejak kedatangan mereka.¹¹⁸ Dengan demikian, walaupun pada akhirnya para terdakwa diizinkan menunjuk pengacara mereka sendiri, namun kasus pembelaan mereka telah dirugikan karena tidak didampingi penasihat hukum dari awal dan akibat intimidasi terhadap para pengacara lembaga bantuan hukum seketika mereka tiba di Dili.

Persidangan

Dakwaan

163. Dakwaan-dakwaannya yang diajukan pada umumnya disusun dengan baik dan logis, dengan memerinci banyak tuduhan faktual. Dakwaan atas Francisco Branco dan Gregório Saldanha berisi dakwaan primer menurut Undang-undang Anti-Subversi, 11/1963. Hukuman maksimal bagi pelanggaran jenis ini adalah hukuman mati di depan regu tembak. Sementara dakwaan subsider yang didasarkan atas KUHAP juga dikenakan terhadap dua terdakwa utama, seperti perbuatan makar dan pernyataan rasa permusuhan terhadap pemerintah Indonesia secara terang-terangan. Dakwaan terhadap enam terdakwa lainnya hanya dakwaan-dakwaannya KUHAP semata-mata.

164. Para terdakwa yang tidak dikenai dakwaan subversi dituntut menurut ketentuan tentang makar, yakni pasal 106 KUHAP, umumnya pertama-tama sebagai pelaku yang telah melakukan atau menyebabkan orang lain melakukan tindak tersebut,¹¹⁹ dan kemudian di bawah dakwaan subsider keterlibatan dalam pemufakatan untuk melakukan tindakan makar.¹²⁰

Kondisi ruang sidang

165. Semua terdakwa diadili secara terpisah, dan semuanya, kecuali seorang, diadili di Pengadilan Negeri Dili. Kecacatan utama dari ruang sidang tersebut adalah tidak adanya transparansi, dengan proses persidangan yang menurut teori seharusnya terbuka tapi pada praktiknya tertutup. Gregório Saldanha menggambarkan situasinya:

*Terbuka dan tertutup, artinya pintu terbuka tapi tetap dijaga. Tapi yang jelas tertutup dan orang tidak boleh masuk, dan teman-teman kita juga berani tapi di pinggir jalan saja.*¹²¹

166. Anggota masyarakat yang hendak masuk dicegah. Menurut Francisco Branco:

*Teman-teman yang mau ikut sidang diteror dan dialangi sehingga tidak ada keterbukaan. Saat di sidang, intel-intel semua hadir dan berpakaian preman. Tetapi kita lihat intel lebih banyak daripada orang yang berada di sana, kebanyakan intelijen dari polisi yang berpakaian preman.*¹²²

*Persidangan selalu tertutup, dan kebanyakan yang hadir ialah perwira intel dan kolaborator mereka.*¹²³

167. Para pengamat internasional diizinkan mengamati proses sidang. Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ) berupaya untuk mengutus dua orang pengamatnya, akan tetapi mereka menemui kesulitan mendapatkan visa. Seorang di antaranya gagal hadir untuk mengamati jalannya sidang karena pengurusan visa yang

terlalu lama.¹²⁴ Pada akhirnya ICJ hanya dapat mengutus satu orang pengamatnya menghadiri sidang tersebut.¹²⁵ *Asia Watch* juga mengutus seorang pengamat sidang. Para pengamat bersikap kritis terhadap sidang yang berlangsung dan menyampaikan pesan berikut kepada Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB.¹²⁶ Walaupun dihadiri oleh para pengamat ini, prosesnya tetap tidak transparan karena khalayak umum tidak bebas menghadiri proses persidangan. Dalam hal ini, proses demikian itu telah melanggar pasal 153(3) KUHAP yang mensyaratkan sidang pengadilan terbuka untuk umum. Oleh karena itu segala keputusan yang dibuat oleh pengadilan dalam keadaan seperti ini seharusnya dibatalkan sesuai Pasal 153(4) KUHAP.

Saksi

168. Informasi yang dipertimbangkan oleh Komisi membawa pada kesimpulan bahwa banyak kesaksian yang diajukan dalam sidang adalah hasil intimidasi dan pemaksaan yang dikenakan kepada para pendukung kemerdekaan (banyak di antara mereka ada dalam penahanan ketika memberi kesaksian), atau merupakan hasil kolaborasi dan kolusi para anggota pasukan keamanan Indonesia. Banyak saksi yang memberatkan diintimidasi, melalui ancaman atas diri mereka atau keluarga mereka, sehingga menghasilkan bukti dan kesaksian palsu. Sebaliknya, para saksi yang meringankan diintimidasi sehingga tidak dapat hadir di pengadilan untuk memberi kesaksian yang bisa meringankan terdakwa.

169. Ketidakmampuan para terdakwa mengajukan saksi untuk mendukung kasus mereka tecermin dari fakta bahwa hanya dalam dua dari sekian banyak persidangan pernah dihadirkan saksi yang meringankan. Kasus-kasus di mana pernah ada terdakwa yang mengajukan saksi adalah kasus Jacinto Alves, yang menghadirkan dua saksi, sementara jaksa menghadirkan sepuluh saksi, dan kasus Gregório Saldanha, di mana dua saksi meringankan hadir, sementara jaksa menghadirkan 24 saksi.

170. Hampir semua saksi dari jaksa adalah anggota aktif pasukan keamanan Indonesia, yang perlu diperhatikan keterlibatan mereka sebagai pelaku utama dalam penembakan warga sipil di Perkuburan Santa Cruz. Saksi lainnya adalah warga sipil Timor-Leste yang ada dalam penahanan dan menjadi sasaran ancaman, intimidasi, serta penyiksaan fisik dan psikologis. Konflik kepentingan yang serius para saksi pasukan keamanan ini tidak menjadi persoalan yang diakui, diselidiki, atau dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh para hakim. Pernyataan berbagai saksi yang memberatkan sering mencakup kesaksian yang persis sama, kata per kata, atau begitu miripnya sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut bukanlah kesaksian yang independen tapi merupakan hasil kolusi dan kolaborasi.

171. Juga patut diragukan apakah beberapa saksi yang memberatkan yang tidak ditahan oleh pasukan keamanan Indonesia, atau yang tidak bekerja untuk mereka, memberi kesaksian bebas dan dapat dipercaya. Mereka justru tampak telah dipaksa untuk memberi kesaksian yang mendukung versi cerita yang diajukan oleh jaksa.

172. Dalam beberapa kasus, apabila selama sidang berlangsung saksi melenceng dari cerita yang sudah ditentukan sebelumnya, diambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini. Sebagai contoh, seorang saksi yang diajukan jaksa dalam pengadilan Gregório Saldanha, bernama Augusto Xavier, belakangan mengatakan bahwa ia telah dipaksa untuk memberikan keterangan palsu oleh para interogator. Ketika kesaksian yang ia berikan melenceng dari yang tertulis dalam BAP yang sudah disiapkan, hakim tidak mengizinkannya meneruskan kesaksian yang sedang ia sampaikan, yang merupakan ceritanya sendiri mengenai apa yang telah terjadi sejauh yang dia ingat, atau untuk merujuknya pada pernyataan dia sebelumnya, yang merupakan perihal yang lazim. Hakim justru dengan serta-merta menanggukkan persidangan.

173. Pasal 163 KUHAP mensyaratkan bahwa para hakim meneliti perbedaan antara kesaksian yang tertulis dan yang disampaikan secara lisan.* Kewajiban-kewajiban ini dimaksud untuk memeriksa keadaan ketika pernyataan-pernyataan tertulis dihasilkan, direkayasa, atau mungkin merupakan hasil intimidasi, atau karena alasan-alasan lain mengapa pernyataan lisan dapat berbeda dengan yang tertulis. Sebaliknya para hakim hanya menganggap bahwa bukti tertulislah yang harus menjadi dasar pembuktian, bukan perkataan saksi. Mereka memerintahkan penundaan, dan selama masa penundaan sidang diambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa para saksi memberi bukti yang sesuai dengan apa yang sebelumnya telah tertulis.

174. Selain kenyataan bahwa para saksi diinterogasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kesalahan mereka dan jawaban-jawaban para saksi ini dicatat tanpa mereka diberi tahu akan hak-haknya, dan juga tidak diberi kesempatan untuk didampingi pengacara, dalam sidang para saksi juga diberi pertanyaan yang dapat memberatkan diri mereka tanpa diingatkan hak-haknya. Setiap terdakwa memberi kesaksian dalam sidang rekannya sesama terdakwa, dan masing-masing ditanya serta menjawab pertanyaan yang memberatkan mereka tanpa diingatkan akan hak-haknya oleh para hakim ketua. Pemeriksaan berkas-berkas pengadilan dari masing-masing kasus tidak mengungkap catatan-catatan atau bukti bahwa pada tersangka diberi tahu akan haknya untuk tidak menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan mereka, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 66 KUHAP.†

175. Satu kendala besar yang dihadapi oleh pembela ialah sulitnya menemukan orang yang mau memberi kesaksian di pengadilan mengenai pengalaman mereka yang sangat berbeda dari versi kejadian yang direstui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Para calon saksi diancam, atau enggan memberi kesaksian, karena kehadiran mereka di pengadilan dapat menarik perhatian pejabat-pejabat intelijen dan meningkatkan kemungkinan intimidasi dan balas dendam dari pihak penguasa Indonesia.

* Pasal 163 KUHAP: "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang telah terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara sidang".

† Lihat misalnya Pasal 14(3)(g) ICCPR: Dalam penentuan tuntutan kejahatan apapun terhadap seseorang, siapapun berhak atas jaminan minimum yang berikut, dalam kesamaan sepenuhnya: (g) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri atau mengaku bersalah.

176. Praktik yang biasa dilakukan sehubungan dengan para saksi yang memberatkan yang tidak dapat hadir pada sidang pengadilan ialah diterimanya kesaksian tertulis mereka sebagai bukti. Hal ini tidak diterapkan untuk para saksi yang diajukan pembela, yang walaupun menghadapi berbagai kesulitan dan bahaya selalu diharapkan hadir.

177. Karena takutnya para saksi meringankan untuk berbicara atau bahkan hadir di pengadilan, tidak ada pembandingan untuk kesaksian yang diberikan oleh para anggota pasukan keamanan Indonesia yang ditengarai terlibat dalam pembantaian. Sebagai contoh, dalam pengadilan Gregório Saldanha, PT3, anggota Brimob 5846, ditanya oleh Hakim Ketua dan memberi kesaksian yang seluruhnya bertentangan dengan fakta yang ditemukan oleh Komisi. Dan cerita saksi di bawah ini tidak dipertanyakan secara sungguh-sungguh selama sidang:

Hakim Anggota I: Apakah para demonstran sudah panik waktu tembakan peringatan pertama?

Saksi XII: Tidak, mereka semakin beringas dan brutal.¹²⁷

178. Komisi telah menerima banyak cerita saksimata yang dapat dipercaya yang bertentangan dengan kesaksian PT3, yang menyatakan bahwa massa di perkuburan Santa Cruz pada umumnya damai, dan bahwa tentara Indonesia mulai menembak tanpa diprovokasi. [Lihat Bagian 3: Sejarah konflik, untuk uraian yang lebih terperinci mengenai demonstrasi tersebut.] Ada ratusan saksi yang selamat dari pembantaian yang dapat menceritakan mengenai hal ini dalam sidang, banyak di antara mereka yang memberi kesaksian pada Komisi. Akan tetapi ketika itu mereka tampaknya terlalu takut untuk bersaksi. Pasal 65 KUHAP menjamin para terdakwa hak untuk mencari dan mengajukan saksi. Komisi menemukan bahwa dalam kasus-kasus yang diperiksa Komisi, banyak sekali para calon saksi yang diintimidasi sehingga tidak memberi kesaksian atau dipaksa memberikan keterangan palsu, yang dengan demikian melanggar hak terdakwa ini.

Bukti

179. Komisi telah menemukan bahwa selain kesaksian para saksi, terdapat bukti-bukti material yang dipalsukan dan dimanipulasi untuk mendukung tuntutan jaksa. Menarik untuk diperhatikan bahwa serangkaian bukti material seperti senjata api dan senjata tajam yang konon digunakan oleh para demonstran diajukan oleh jaksa penuntut. Rekaman film yang ada mengenai demonstrasi, yang direkam oleh Max Stahl dan menunjukkan bahwa demonstrasi tersebut umumnya bersifat damai dan pembantaian tersebut tidak diprovokasi, tidak diajukan oleh penuntut untuk digunakan sebagai bukti, walaupun rekaman tersebut mudah didapat dan disiarkan di televisi di seluruh dunia. Rekaman ini memperlihatkan anggota militer Indonesia menembak langsung ke arah laki-laki dan perempuan yang tidak bersenjata dan tidak melakukan ancaman samasekali, dan bahkan dalam beberapa kasus mereka sedang melarikan diri.

180. Praktik yang tidak layak mengenai pembuktian tergambar dengan baik dalam hal senjata. Menurut pihak jaksa, para terdakwa memiliki atau membiarkan digunakannya senjata yang efektif. Menurut Gregório Saldanha:

Di sana disiapkan berbagai senjata dan granat ada delapan dan ada pisau berapa dos begitu. Itu dikatakan bahwa saya dengan barang itu diangkat, semua gitu. Ini salah satu contoh bahwa mereka bohong.¹²⁸

181. Penasihat hukum dalam sidang Gregório Saldanha menunjukkan bahwa jaksa telah memperlihatkan senjataapi yang konon merupakan milik terdakwa, tapi tidak mampu mengajukan saksi yang dapat menerangkan di mana mereka menemukan senjataapi dan pisau-pisau tersebut, sehingga pada kenyataannya bukti-bukti tersebut hanyalah benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan para terdakwa. Pembela juga bersandar pada alasan bahwa segala penggunaan senjataapi dalam demonstrasi tersebut adalah hasil kerja agen-agen intelijen militer Indonesia yang berpakaian seperti pemuda sipil biasa, dan berpura-pura menjadi bagian dari demonstrasi tersebut untuk memberi alasan bagi anggota militer merespons demonstrasi tersebut dengan kekerasan.

182. Adanya barang bukti yang berkaitan dengan senjataapi atau senjata tajam, atau adanya tembakan dari arah para demonstiran menunjukkan bahwa hal tersebut terencana dan merupakan pekerjaan pihak intel yang menyusup ke dalam barisan demonstiran.¹²⁹

183. Tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan di Pengadilan Negeri Dili, karena tidak ada surat bukti ataupun kesaksian yang menyatakan dengan tegas dari mana asal senjata tajam dan senjataapi tersebut dan kapan barang-barang bukti tersebut disita.¹³⁰

184. Banyak bukti yang diajukan oleh jaksa dalam pengadilan-pengadilan telah direkayasa untuk mendukung tuntutan bahwa para demonstiran memegang banyak senjata dan menggunakan kekerasan; bahwa mereka telah menyerang pasukan keamanan yang terpaksa menjawab dengan menembaki mereka. Komisi telah mempelajari rekaman film dari kejadian tersebut, yang jelas-jelas menunjukkan anggota militer Indonesia telah menembaki muda-mudi yang berusaha berlindung atau melarikan diri. Komisi juga telah mewawancarai dan mengambil pernyataan banyak saksi atas kejadian tersebut. Jelas bagi Komisi bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi militer dan polisi yang diajukan oleh jaksa dalam sidang tersebut mengenai versi kejadian ini telah direkayasa.

Jaksa

185. Kerja jaksa selama tahap-tahap formal persidangan tampaknya telah dilaksanakan dengan baik. Surat dakwaan disusun dengan kuat dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama sidang, walau sedikit, mengikuti argumen-argumen yang diajukan dalam surat dakwaan. Namun bukti yang diajukan selama sidang bukanlah merupakan kompilasi dari sumber-sumber independen yang diajukan oleh

jaksa kepada pengadilan untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Komisi, tampaknya hasil dari persidangan telah diputuskan sebelum sidang itu dilaksanakan, sehingga tugas jaksa di sini adalah untuk menyediakan bahan yang cukup untuk memperkuat putusan bersalah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

186. Dalam sistem hukum sipil yang berlaku di Indonesia, jaksa wajib mengajukan materi-materi yang memberatkan dan meringankan kepada pengadilan. Namun, dalam pengadilan Santa Cruz, jaksa tidak berusaha mencari materi yang meringankan, walaupun banyak sekali saksi yang melihat apa yang sebenarnya terjadi dan kejadian tersebut terekam dalam film Max Stahl. Max Stahl tidak pernah dihubungi untuk memberi kesaksian bagi jaksa mengenai keadaan ketika film tersebut direkam. Hanya sedikit usaha yang dilakukan untuk menjamin bahwa para saksi yang ada dapat memberikan kesaksian dalam suasana yang bebas dari intimidasi, atau bahwa kepada sidang telah diberikan pandangan yang berimbang.

187. Bukti yang diajukan umumnya merupakan kumpulan materi dan pernyataan saksi yang sangat dikontrol dan dimanipulasi untuk memberi hasil seperti yang telah ditentukan sebelumnya, yakni putusan bersalah terhadap terdakwa. Putusan bersalah ini merupakan tujuan politik penting, yang dipandang perlu untuk menjawab kemarahan internasional atas pembantaian serta untuk menekan segala niat di masa mendatang untuk berdemonstrasi menentang pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste, atau untuk mendukung hak atas penentuan nasib sendiri. Proses peradilan bagi orang-orang yang didakwa itu merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan ini. Oleh karena itu, bukti yang menjadi dasar bagi hasil yang telah direncanakan itu dimanipulasi untuk menutup segala kemungkinan yang bisa menghalangi tercapainya tujuan politik tersebut.

Pembela

188. Anggota tim bantuan hukum Indonesia yang membantu dalam persidangan menyatakan bahwa bagi para pengacara hak-hak asasi manusia Indonesia yang membela para tawanan Timor-Leste, rujukan utamanya ialah Undang-Undang Dasar Indonesia. Di dalam UUD Indonesia ini hak menentukan nasib sendiri telah diabadikan. Mereka juga menyatakan bahwa undang-undang hak asasi manusia internasional pun merupakan bagian formal dalam sistem hukum Indonesia dan bahwa mereka berjuang untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini. Namun dalam mengejar cita-cita keadilan itu, mereka menghadapi tantangan keras dari para pejabat yang mengabdikan tujuan politik Orde Baru tanpa memperhatikan tuntutan-tuntutan UUD Indonesia atau perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang yang tersangka melakukan oposisi politik, yang ditahan dalam keadaan yang lebih buruk daripada penjahat pada umumnya:

Saya terkejut ketika ada di Dili. Bagaimana mungkin para pejabat Indonesia saat itu...ketika kami diminta menemui Kapolwil (Kepala Polisi Wilayah) di Dili...ia langsung mengajukan pertanyaan...“Saudara orang Indonesia?”...Seakan-akan kami para pembela (tahanan) bukan orang Indonesia. Hendaknya jelas bahwa komitmen kami pada hukum

dan hak-hak asasi manusia...kami tidak melihat pada masalah kebangsaan, masalah-masalah yang ada di balik perkara, masalah politik atau apapun. Kami melihat bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, diadili mempunyai hak untuk dibela. Setiap orang yang diadili mempunyai hak untuk menghadirkan pengacara.¹³¹

189. Komisi mengakui keberanian dan dedikasi penasihat hukum Indonesia yang telah mengambil risiko besar atas keamanan pribadi dan karier mereka dengan membela hak-hak para terdakwa Timor-Leste dalam persidangan-persidangan Santa Cruz. Domi Yos Atok, Artidjo Alkostar, Luhut M.P. Pangaribuan, dan Nur Ismanto patut dipuji atas komitmen yang mereka tunjukkan pada nilai-nilai keadilan dan hak-hak asasi manusia dalam menghadapi ancaman, intimidasi, dan gangguan. Komisi juga menyadari bahwa reformasi dan perbaikan dalam sistem peradilan, baik di Indonesia dan Timor-Leste, bergantung pada individu-individu seperti mereka, yang berpegang teguh pada komitmen, prinsip, dan integritas tanpa memedulikan konteks politik, ancaman, atau pengorbanan. Tidak akan ada harapan bagi reformasi dan perbaikan apabila sifat-sifat seperti ini dan orang-orang yang memperlihatkan sifat-sifat demikian itu tidak diberi penghormatan setinggi-tingginya yang sudah selayaknya mereka terima, dan dapat menjadi contoh teladan bagi yang lain. Terdakwa Jacinto Alves menyatakan:

Penasihat kami itu dari LBH itu mendapat ancaman; jadi hotelnya dikontrol dan lain-lainnya; tapi ancaman juga dari jaksa di persidangan, seperti umpamanya judul yang mereka berikan kepada pembelaan mereka itu adalah sikap porseri [coercion, pemaksaan] dan jaksa memaksa penasihat untuk menarik judul itu; apabila dia tidak mau, kasusnya dibawa ke pengadilan. Jadi, ancaman-ancaman seperti itu adalah hal yang lumrah.¹³²

190. Menurut terdakwa Francisco Branco:

Pengacara dengan keluarga baik sekali, baik karena bisa datang ke keluarga untuk minta dukungan moral; dengan militer mereka dicurigai, dibuntuti terus ke mana mereka pergi.¹³³

191. Tim penasihat hukum yang tampil membela para terdakwa dituduh tidak patriotik selama proses persidangan. Para jaksa dibiarkan oleh para hakim untuk melenceng dari persoalan yang sedang dibahas di sidang, yakni apakah para terdakwa memang telah melakukan segala tindakan yang dituduhkan kepada mereka, untuk menyerang integritas para penasihat hukum dan mengatakan bahwa kerja mereka dalam membela para terdakwa bertentangan dengan cita-cita bangsa. Kutipan berikut ini dari transkripsi sidang Gregório Saldanha, memberi gambaran jelas mengenai paham yang dianut oleh pihak jaksa, bahwa pekerjaan jaksa dan pembela harus diarahkan untuk mengamankan tujuan politik integrasi, ketimbang mencari kebenaran yang berkenaan dengan dakwaan.

Sangat disayangkan bahwa apa yang disampaikan oleh tim penasihat hukum dalam eksepsinya itu kurang menguntungkan bagi stabilitas keamanan di Timor Timur, dapat mendorong ke arah terciptanya kurang kepercayaan terhadap sejarah proses terjadinya integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³⁴

192. Pernyataan-pernyataan seperti ini tidak hanya melecehkan kehormatan dan kemandirian proses peradilan, tetapi juga mencerminkan kegagalan yang nyata dalam mengakui pengamalan hak terdakwa untuk membela dakwaan yang dikenakan terhadapnya sebagai dasar sistem peradilan yang mereka gunakan. Penting untuk dicatat bahwa serangan-serangan politis terhadap penasihat hukum, seperti tersebut di atas, sering dibiarkan tanpa campurtangan dari hakim ketua.

193. Tidak sedikit juga warganegara Indonesia yang membantu para tahanan politik selama masa penahanan mereka, dengan membesuk dan memantau keadaan mereka. Komisi sangat menghargai sumbangan terhadap kemanusiaan dari mereka itu, yang menempatkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan cinta-kasih universal tanpa peduli terhadap ancaman akan keselamatan mereka sendiri. Ade Sitompul salah seorang di antara mereka yang telah memberi teladan luarbiasa tentang bagaimana nilai-nilai universal tersebut melahirkan aksi-aksi perseorangan yang tanpa pamrih.

Percakapan kami telah membuka hati dan pikiran tentang bagaimana orang-orang itu dahulu berjuang untuk kemerdekaan nasional, untuk negeri dan bangsa mereka, dan bagaimana mereka merasakan pendudukan Indonesia. Kisah-kisah mereka sama seperti pengalaman saya ketika masih muda dan berjuang untuk kemerdekaan dari Belanda.

194. Menanggapi serangan-serangan terhadap integritas mereka, penasihat hukum berusaha menjelaskan bahwa mereka terdorong oleh prinsip-prinsip universal dan juga patriotisme bagi bangsa mereka, Indonesia, dan sebagai pegawai negeri sipil wajib berusaha untuk memperbaiki kinerja dan citra pemerintah Indonesia.

[Kami] mencintai kebenaran dan kebebasan...agar rakyat Timor-Timur diberi kebebasan untuk berdiri di atas kakinya sendiri, sebagaimana bangsa-bangsa lainnya dan mendapat hak yang universal untuk menentukan nasibnya sendiri, sesuai prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi 1514 (XV), 14 Desember 1960.¹³⁵

Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Republik Indonesia, kami merasa secara moral turut menyumbangkan sesuatu guna memperbaiki citra negara Republik Indonesia di mata Dunia Internasional, yang telah merosot sejak masuknya TNI ke Timor Timur.¹³⁶

195. Tim pembela terpaksa bekerja dengan tenggat waktu yang sangat sempit dan sering bahkan tidak diberi akses dasar kepada klien mereka. Dalam kasus Francisco Branco, tim pembela hanya diberi tiga hari untuk menyusun tanggapan pembelaan mereka atas dakwaan, setelah mereka resmi diizinkan untuk bekerja. Juga

Sebagai tahanan mereka [klien mereka], mereka mencoba mengunjungi saya, tapi selalu ditolak...mereka tidak diizinkan untuk melihat para tahanan.¹³⁷

196. Argumen hukum oleh tim pembela didasarkan atas pendapat bahwa integrasi Timor-Leste ke dalam Indonesia itu tidak sah, dan akan terus tidak sah selama orang-orang Timor-Leste tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penentuan pilihan yang bebas dan adil mengenai status politik mereka. Argumen ini dikemukakan dengan beberapa cara, contohnya melalui cerita yang terperinci mengenai sejarah Timor-Leste dari masa pra-kolonial sampai invasi dan pendudukan oleh Indonesia; dengan mempersoalkan keabsahan berlakunya Deklarasi Balibó; dengan mengatakan bahwa hak atas penentuan nasib sendiri didukung oleh UUD 1945; serta dengan argumen-argumen yang didasarkan pada hukum internasional dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Jika klaim Indonesia atas Timor-Leste tidak sah, maka tidaklah berdasar tuduhan bahwa orang-orang Timor-Leste telah melakukan makar karena tidak mendukung kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste.

Inti pembelaan mereka [pengacara] mengatakan bahwa, “Hak penentuan nasib sendiri, masalah Timor-Leste masih dalam proses, keberadaan pemerintah Indonesia di wilayah Timor-Leste adalah suatu pelanggaran hukum Internasional, karena rakyat Timor-Leste belum mendapat kesempatan untuk menentukan nasib sendiri, dan keberadaan Indonesia di sini adalah suatu paksaan atas kehendak rakyat Timor-Leste.¹³⁸

197. Dalam persidangan Gregório Saldanha tim penasihat hukum memberi submisi tertulis yang menjelaskan:

1. Bahwa Deklarasi Balibó yang dilanjutkan Petisi Integrasi oleh gabungan 4 (empat) partai politik: UDT, APODETI, KOTA, dan TRABALHISTA tidak sah karena hanya mewakili sebahagian kecil rakyat Timor Timur yang mengunjungi ke Atambua [Nusa Tenggara Timur, Indonesia];
2. Bahwa masalah Timor Timur adalah masalah internasional, bukan masalah intern Indonesia.¹³⁹

198. Argumen-argumen politik juga diangkat oleh beberapa terdakwa. Pernyataan Jacinto Alves yang bertajuk “Perjuangan adalah Penemuan Kembali Bangsa yang Tidak Pernah Mati”, membandingkan antara perjuangan kemerdekaan Timor-Leste dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia sendiri:

Sejarah adalah suatu perjalanan yang tetap dan tak tertahan, serta terus-menerus maju ke depan, tidak pernah mundur, membentuk

pribadi manusia di sepanjang generasi, sesuai dengan irama perjalanannya. Dari sudut pandangan inilah, kita melihat kembali sejarah Timor Timur dan mencari kesamaan-kesamaannya dengan sejarah bangsa Indonesia.¹⁴⁰

199. Pernyataan-pernyataan yang ditulis oleh para terdakwa juga mengajukan argumen yang didasarkan pada hukum internasional:

Semua aturan dan perjanjian internasional yang ditetapkan oleh PBB mengenai masalah Timor-Timur adalah sah dan berlaku juga untuk Indonesia, karena semuanya berdasarkan hukum internasional yang juga menjadi sumber bagi hukum nasional Indonesia.¹⁴¹

Hakim

200. Komisi yakin bahwa sidang-sidang tiga majelis hakim* tidak berlangsung bebas dan tidak memihak. Terlihat bahwa para hakim bekerja sama erat, baik langsung maupun tidak langsung, dengan lembaga-lembaga intelijen dan penyidik polisi yang bertujuan menjamin kebenaran tuduhan yang bermotif politik terhadap terdakwa. Semua terdakwa dan banyak saksi lainnya yang diwawancarai Komisi sangat meyakini adanya peranan militer dalam memimpin jalannya persidangan. Francisco Branco berkata kepada Komisi dalam wawancaranya:

Karena hakim sudah di pihak yang penguasa militer, maka pengadilan yang seharusnya adil dan bebas menjadi diperalat oleh militer, dan mereka hanya menunggu perintah dari BAKIN, ke arah mana tetap diawasi.

Mereka tidak independen, diperalat oleh penguasa sendiri. Kompetensi mereka, mereka menunggu perintah dari BAKIN juga sampai ke pasal-pasal, mereka mencari pasal-pasal yang memberatkan. Cara memerintahkan itu bagaimana? Di dalam kepolisian pun, proses interogasi diawasi oleh BAKIN. Juga para hakim, mereka bisa melaksanakan tugasnya tapi tidak independen.

CAVR: Menurut anda semua hakim dikendalikan oleh pusat atau militer?

FB: Ya, itu terlihat dengan jelas, sampai putusan pun hakim tidak tahu, pada saat membacakan putusan baru disodorkan oleh intel.

CAVR: Bagaimana dengan keputusan hakim?

FB: Seperti tadi saya mengatakan, pada saat pembacaan baru disodorkan oleh anggota intel yang sudah ada di sana, di dalam ruangan.

* Hakim berganti-ganti untuk setiap persidangan. Di antara mereka itu termasuk Pandapotan Sinaga (Ketua), A Bire Radjah, Andreas Don Rade, Hieronymus Godang (Ketua), Arnold Ratu Tanahboleng, Edhi Sudarmuhono, Amir Pane (Ketua), Hizbullah dan Suhardjono.

CAVR: *Dia menyodorkan apa itu?*

FB: *Satu kertas kecil kepada hakim itu pada saat putusan baru disodorkan.*

CAVR: *Anda lihat sendiri?*

FB: *Ya saya lihat sendiri.*¹⁴²

201. Dalam sidang pengadilan Francisco Branco, terjadi tanya-jawab berikut, yang memperlihatkan bagaimana usaha hakim memperkuat legitimasi pendudukan melalui sidang pengadilan:

Hakim 1: Saksi bernama Catherina. Siapa yang memberi anda nama ini?

Saksi 2: Orangtua saya memberi nama itu pada saya.

Hakim 1: Mengapa anda tidak mengganti nama anda sekarang?

Saksi 2: Saya tidak bisa. Itu nama baptis saya menurut agama Katolik.

Hakim 1: Saya jelaskan kepada Saksi, bahwa nama itu suatu kenyataan.

*Persis sama seperti integrasi Timor Timur, itu satu kenyataan.*¹⁴³

202. Menurut pasal 188 KUHAP, pemeriksaan bukti dan kesaksian oleh para hakim harus dilakukan “dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.” Dalam hal keterangan saksi, menurut pasal 185(6) KUHAP para hakim harus mempertimbangkan kekuatan bukti tersebut, motivasi dan faktor-faktor yang mungkin memengaruhi.* Tidak ada indikasi bahwa para hakim mempertimbangkan kesaksian dan bukti. Sebaliknya, pada umumnya para hakim samasekali tidak mempertanyakan bukti yang diajukan oleh jaksa, serta tidak memberi alasan mengapa menurut mereka bukti-bukti tersebut sudah cukup kuat.

203. Dengan mengalangi pemeriksaan silang oleh pembela, mendorong kesaksian yang pro-Indonesia, dan tidak mempertanyakan kekuatan bukti, para hakim secara efektif telah mendukung tuduhan jaksa dan membatasi kemungkinan diajukannya bukti-bukti yang meringankan dalam sidang.

204. Tampaknya karena motivasi politik untuk menghukum para terdakwa itu, para hakim dalam beberapa kasus mensyaratkan para terdakwa untuk membuktikan bahwa mereka tidak melanggar hukum. Kenyataan bahwa pembela tidak dapat mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah adalah alasan yang digunakan untuk penghukuman. Hal ini merupakan kesalahan tafsir yang amat mendasar dari prinsip dasar anggapan tidak bersalah.

.....
* Pasal 185(6) KUHAP: “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:...c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi memberikan keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

205. Dalam kasus putusan Jacinto Alves, para hakim menghukum terdakwa, walaupun terdapat pernyataan berikut dalam putusan: “Selama persidangan, Majelis Hakim tidak ada mendapatkan bukti-bukti yang dapat dipergunakan sebagai alasan menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.”¹⁴⁴

Putusan

206. Sebagian besar terdakwa ditemukan bersalah atas tuduhan primer dalam surat dakwaan mereka. [Lihat Lampiran I: Daftar tuduhan dan hukuman.] Pengecualiannya adalah Juvencio Martíns, Bonafacio Magno, dan Filomeno da Silva Ferreira yang dibebaskan dari tuduhan primer makar, namun ditemukan bersalah atas tuduhan subsidernya yakni konspirasi untuk perbuatan makar.

207. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat berat. Lamanya bervariasi dari 5 tahun 8 bulan bagi Filomeno da Silva Ferreira, sampai hukuman seumur hidup bagi Gregório Saldanha. [Lihat Lampiran I: Daftar Tuduhan dan Hukuman.] Para terdakwa yang dibebaskan dari tuduhan primer namun diputus bersalah atas tuduhan subsider konspirasi perbuatan makar menerima hukuman yang paling ringan.

208. Para hakim mendasarkan putusan mereka atas berlembar-lembar justifikasi integrasi Timor-Leste dengan Indonesia, lebih lanjut membuktikan bahwa pengadilan ini sebagian berfungsi memberi legitimasi atas pendudukan Indonesia.

209. Alasan umum bagi putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut: Timor-Leste secara sah merupakan bagian dari Indonesia; Indonesia telah memberi sumbangan besar dalam pembangunan Timor-Leste; dan karena demonstrasi Santa Cruz bertentangan dengan Pancasila dan tidak menghargai pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia, maka tindakan-tindakan yang dilakukan di Santa Cruz dapat dibenarkan, yaitu demi menegakkan nilai-nilai Pancasila.

210. Premis awal dari semua putusan ialah bahwa Timor-Leste telah secara sah diintegrasikan ke dalam Indonesia. Putusan atas Jacinto Alves menggambarkan hal ini:

Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia bukanlah atas inisiatif Pemerintah Indonesia ataupun Rakyat Indonesia, akan tetapi dasarnya adalah kehendak Rakyat Timor Timur sendiri... pernyataan kehendak Rakyat Timor Timur itu secara keseluruhan telah dituangkan dalam Proklamasi Balibó.¹⁴⁵

211. Pada persidangan, penasihat hukum berargumen bahwa Undang-undang Anti-Subversi melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan bahwa dengan demikian undang-undang tersebut harus dibatalkan dan segala dakwaan yang didasarkan atas undang-undang tersebut tidak sah.¹⁴⁶ Argumen ini ditolak dalam dua sidang yang melibatkan tuduhan subversi.

212. Bentuk-bentuk dakwaan dan putusan tidak terlalu bermasalah. Hanya ketika menimbang lebih dalam keseluruhan faktor dalam sidang, menjadi jelas bahwa para saksi yang mungkin dapat memberi kesaksian sebenarnya mengenai apa yang terjadi, telah dicegah untuk bersaksi, yang lain diancam dan diintimidasi agar mendukung tuduhan jaksa, bukti-bukti materiil dipalsukan, materi yang meringankan diabaikan, dan anggota militer dan polisi berkolusi dan merekayasa bukti-bukti mereka. Dakwaan dan putusan yang tampak rasional adalah sekadar polesan ketidakberpihakan yang menutupi proses yang sangat cacat.

213. Putusan-putusan umumnya menunjukkan bahwa para terdakwa tidak hanya bersalah atas subversi dengan mengorganisasi demonstrasi, tapi juga bertanggung jawab atas pembunuhan demonstran Timor-Leste di perkuburan Santa Cruz, walaupun para korban adalah teman dan rekan-rekan mereka yang ditembak oleh anggota militer Indonesia. Dalam putusan Francisco Branco:

Menimbang, bahwa akibat demonstrasi tersebut telah menimbulkan:

1. Korban manusia, yang menurut hasil penelitian KPN (Komisi Penyelidik Nasional) 50 orang meninggal dunia dan 91 orang lebih luka-luka
2. Timbul keresahan dalam masyarakat.¹⁴⁷

214. Hukuman seumur hidup atas Gregório Saldanha dianggap layak karena hal-hal yang memberatkan, termasuk fakta bahwa tindakan-tindakannya dirancang untuk menarik perhatian Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengenai apa yang terjadi di Timor-Leste:

Perbuatan Terdakwa yang konfrontatif terhadap Pemerintah, yang diwujudkan dengan memimpin dan menggerakkan demonstrasi pada 12 November 1991, pada saat kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia utusan PBB, maka jelas bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertujuan merusak wibawa Pemerintah Indonesia di mata internasional serta dapat memberikan gambaran yang keliru tentang proses integrasi.¹⁴⁸

215. Bagi sebagian besar terdakwa, posisi mereka sebagai pegawai negeri sipil Indonesia dianggap sebagai faktor yang memberatkan.¹⁴⁹ Faktor-faktor yang meringankan dimasukkan, namun umumnya faktor-faktor ini sangat baku, seperti perilaku terdakwa selama sidang dan kebutuhan keluarga mereka.

216. Putusan-putusan tersebut juga menarik karena dibuat begitu terperinci. Dalam hal ini putusan tersebut mencerminkan upaya selama proses persidangan untuk memberi kesan adanya legalitas dan proses yang adil, yang menyelubungi manipulasi, penyiksaan, intimidasi, dan rekayasa yang mewarnai aspek interogasi dan penuntutan dalam proses ini.

Bandung

217. Sebagian besar terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di Kupang:¹⁵⁰

*Saya maupun Pengacara menolak putusan dari Hakim, setelah itu naik banding ke pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sampai selesai hingga putusan akhir.*¹⁵¹

218. Dengan melakukan ini mereka menggunakan haknya menurut pasal 67 KUHAP untuk mendapatkan peninjauan atas perkaranya oleh pengadilan yang lebih tinggi.¹⁵² Namun sangat diragukan bahwa proses banding ini dapat mengatasi proses pengadilan yang sudah cacat. Proses banding ini tampaknya merupakan “perilaku stempel karet” atas keputusan pengadilan yang lebih rendah, dan pada umumnya banding yang diajukan ditolak tanpa alasan apapun.

219. Semua keputusan banding dari Pengadilan Tinggi di Kupang dibuka dengan sejarah panjang-lebar prosedur kasus tersebut. Dalam semua keputusan, kecuali satu, pengadilan tinggi menyetujui keseluruhan putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Dili tanpa alasan atau justifikasi. Dalam satu kasus pengecualian, Pengadilan Tinggi hanya mengubah susunan kata-kata putusan pengadilan Dili dalam hal dakwaan yang dikenakan.

220. Kasus Gregório Saldanha berikut ini merupakan contoh khas bagaimana Pengadilan Tinggi membenarkan putusannya:

*Pertimbangan dan alasan-alasan yang diuraikan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah dipandang tepat dan benar, karenanya dapatlah diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini.*¹⁵³

221. Dengan demikian tidak ada uraian terhadap submisi oleh jaksa maupun pembela dan tidak ada analisis tertulis, hanya pengukuhan terhadap keputusan mahkamah pengadilan yang lebih rendah. Hal ini tidak dapat dianggap sebagai banding yang layak. Jaksa dan pembela mengajukan submisi banding yang panjang, yang umumnya mencerminkan segala argumen yang diangkat dalam persidangan, dan submisi-submisi ini bahkan tidak disebut dalam keputusan banding.

222. Semua terdakwa yang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Kupang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, untuk mendapatkan peninjauan atas kasusnya. Semua kasasi yang diajukan ditolak tanpa alasan, dengan keterangan singkat bahwa permohonan banding kepada Mahkamah Agung ditolak.

223. Terdakwa yang diadili di Dili yang tidak mengajukan banding hanyalah mereka yang diwakili oleh pengacara Ponco Atmono yang ditunjuk Indonesia. Alih-alih mengajukan banding, Carlos Lemos dan Bonafacio Magno mengajukan grasi kepada Presiden Soeharto.¹⁵⁴ Dalam kedua kasus, para terdakwa memohon dan dikabulkan pengurangan hukuman dua tahun penjara. Keputusan tertanggal

10 Agustus 1993 tersebut ditandatangani oleh Presiden Soeharto sendiri. Tidak ada permohonan serupa dalam berkas-berkas terdakwa yang lain, dan tampaknya permohonan grasi ini adalah strategi Ponco Atmono yang sukses.

Pemenjaraan

224. Setelah hukuman dijatuhkan, para terpidana dikirim ke Comarca Balide pada Agustus 1992. Dari sini, semua terpidana dipindahkan ke LP Becora seputar waktu kunjungan delegasi PBB yang dipimpin oleh Amos Wako. Setelah dua minggu di Becora, Carlos Lemos dan Bonifacio Fereira dikirim ke Kupang untuk menjalani hukumannya. Gregório Saldanha, Francisco Branco, Jacinto Alves, Juvencio Martins, Filomeno Pereira, dan Saturnino Belo diterbangkan ke Semarang setelah dua tahun di Becora. Pada September 1999, Gregório Saldanha dan Francisco Branco dipindahkan ke Penjara Cipinang di Jakarta dan terus berada di situ sampai keduanya dibebaskan pada 10 Desember 1999.

Pengadilan dan penghukuman anggota pasukan keamanan Indonesia yang terlibat dalam Pembantaian Santa Cruz.

225. Sebuah gambaran yang berguna mengenai ketidakadilan pengadilan kasus Santa Cruz dapat dilihat jika membandingkan pengadilan militer di Bali terhadap sepuluh perwira militer rendahan pada 1992. Semua, kecuali satu orang, dikenai tuduhan disipliner ringan sehubungan dengan pembantaian Santa Cruz. Tidak ada satupun anggota militer yang dikenai pelanggaran pidana seperti pembunuhan atau penyiksaan, walaupun terdapat banyak sekali bukti kuat yang dapat menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan ini dilakukan.¹⁵⁵ Hukuman yang dijatuhkan bervariasi antara 8 sampai 18 bulan. Dengan demikian, para terdakwa orang Timor-Leste menerima hukuman sampai penjara seumur hidup atas perannya mengorganisasi demonstrasi, sementara banyak tentara dan perwira yang terlibat dalam pembunuhan massal terhadap lebih daripada 200 demonstran damai mendapatkan impunitas. Menurut Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ), yang mengawasi kedua seri pengadilan ini:

Tuduhan yang dikenakan terhadap para perwira dan anggota militer menyusul insiden 12 November jelas-jelas tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan...Dapat dikatakan bahwa 'keadilan' telah dijungkirbalikkan dalam hal ini.¹⁵⁶

Kesimpulan

226. Komisi telah mempelajari berkas-berkas pengadilan untuk masing-masing terdakwa yang diadili berkenaan dengan Pembantaian Santa Cruz; wawancara dengan orang-orang yang ikut serta dalam pengadilan-pengadilan sebagai saksi,

terdakwa, dan pengacara; pernyataan banyak individu yang hadir selama kejadian Santa Cruz; dan bahan-bahan sekunder seperti laporan-laporan organisasi seperti Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ) yang mengawasi jalannya persidangan dan Amnesty International.

227. Di bagian lain Laporan ini, Komisi mengetengahkan cerita yang lebih mendalam mengenai apa yang terjadi selama demonstrasi dan pembantaian yang menyusul di perkuburan. Komisi telah menemukan bukti yang tidak bisa dibantah bahwa demonstrasi dimaksudkan untuk bersifat damai, bahwa sebuah insiden yang tidak direncanakan terjadi selama arak-arakan, yang melibatkan penyerangan dan luka-luka pada seorang anggota pasukan keamanan Indonesia, dan reaksi yang berlebihan terhadap insiden ini membuat anggota militer Indonesia menembak secara sembarangan ke kerumunan demonstran, membunuh lebih daripada 200 demonstran dan melukai banyak lainnya (untuk perincian tentang korban pembantaian, lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Selain mempelajari banyak pernyataan saksi yang menguatkan, Komisi telah melihat rekaman video kejadian yang jelas-jelas memperlihatkan pasukan Indonesia tanpa provokasi menembak pemuda dan pemudi yang tidak bersenjata.

228. Sebelum insiden Santa Cruz, para wartawan dilarang masuk ke Timor-Leste dan informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan anggota pasukan keamanan secara besar-besaran ditekan. Rekaman video pembantaian tersebut diambil sembunyi-sembunyi dan diselundupkan keluar Timor-Leste. Rekaman ini kemudian diedarkan secara internasional dan menimbulkan kemarahan dunia dan seruan untuk keadilan bagi mereka yang terlibat. Tanggapan pejabat tinggi pemerintah dan militer Indonesia atas kemarahan internasional ini diberikan dengan merancang sebuah strategi yang canggih, yang ditujukan untuk menciptakan kesan bahwa:

- Para demonstran itu beringas dan telah menyerang pasukan keamanan
- Para demonstran digiring oleh elemen-elemen subversif yang sudah merencanakan kekerasan
- Pasukan keamanan dipaksa membela diri mereka dan dalam tindakan pembelaan diri inilah sejumlah kecil anggota pasukan melakukan pelanggaran disiplin
- Pemerintah Indonesia bermaksud mengikuti prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, dan dengan demikian telah memberi masing-masing terdakwa orang Timor-Leste sebuah proses pengadilan yang adil
- Pemerintah Indonesia bersikap adil dengan tidak hanya telah mengadili dan menghukum orang Timor-Leste, tetapi juga anggota pasukan keamanannya sendiri yang terlibat dalam pembantaian

229. Kecanggihan strategi ini melibatkan penggunaan mekanisme pengadilan guna mendukung tuntutan-tuntutan tersebut di atas, walaupun tidak satupun yang benar. Proses pengadilan dimanipulasi, sehingga dapat dipastikan bahwa hasil sidang pengadilan akan mendukung tuntutan di atas dan menciptakan

suatu polesan sikap terhormat, yang dapat dipakai untuk membela diri terhadap tuduhan pembiaran. Tidak ada samasekali niat untuk mengungkap kebenaran, menghukum orang-orang yang bertanggung jawab, dan menjalankan pengadilan yang adil bagi para terdakwa. Dengan cara ini pengadilan Santa Cruz merupakan 'pengadilan sandiwaru' yang khas, seperti yang dilakukan oleh diktator rezim otoriter lainnya.

230. Dengan menyelidiki lebih dalam proses pengadilan, Komisi menemukan bahwa para anggota militer yang memainkan peran utama dalam pembantaian tersebut tidak dihukum, dan mereka yang memberi perintah untuk menyerang warga sipil yang tidak bersenjata mendapatkan impunitas total. Beberapa perwira rendah didakwa dengan pelanggaran non-kriminal dan dijatuhi hukuman ringan. Sekali lagi, strategi di balik langkah ini ialah untuk memberi ilusi bahwa suatu upaya serius telah diambil dan memberi dasar untuk merespons para kritikus, dan sesungguhnya menyembunyikan alih-alih mengungkapkan kebenaran.

231. Dengan cara yang sama, pengadilan para terdakwa Timor-Leste merupakan polesan kehormatan yang begitu dibikin-bikin. Walaupun dakwaan dan putusan yang dibikin tertulis bisa menunjukkan bahwa proses ini berjalan terhormat, namun hampir semua tahap antara dakwaan dan putusan itu cacat secara fundamental. Bukti-bukti direayasa, saksi diintimidasi agar berbohong atau tidak hadir, dan terdakwa disiksa agar menandatangani pengakuan. Jika bukti yang diajukan ke pengadilan sudah bias, dipilih hanya untuk menguntungkan satu pihak, pengadilan harus "secara sah" membuat putusan yang sesuai dengan bahan-bahan yang telah dipertimbangkan. Komisi menemukan bahwa strategi yang digunakan dalam pengadilan Santa Cruz menjamin bahwa bukti yang diajukan ke pengadilan hanya mendukung satu kemungkinan kesimpulan. Untuk menjamin hasil yang diinginkan, bukti dimanipulasi dan dipalsukan, yang menuntut partisipasi dan kepatuhan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

232. Komisi menemukan bahwa polisi dan anggota militer yang menyelidiki, jaksa penuntut dan penasihat hukum yang ditunjuk pemerintah dan para hakim yang terlibat dalam persidangan berkolusi, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk menggagalkan keadilan dalam proses pengadilan ini demi menghasilkan hasil politik yang sudah ditentukan sebelumnya.

233. Polisi dan anggota militer yang terlibat dalam penyelidikan menyiksa dan mengintimidasi para saksi agar mereka menceritakan versi kejadian yang sesuai dengan maksud-maksud politik dari pengadilan tersebut. Mereka mengancam dan mengintimidasi saksi-saksi lainnya dan anggota keluarga mereka agar juga takut memberikan kesaksian yang sebenarnya. Ruang sidang secara efektif tertutup untuk khalayak umum guna menghindari kritik, termasuk melalui pengaruh hadirnya sejumlah besar anggota militer pada sidang. Mereka juga mengumpulkan bukti-bukti palsu, seperti senjata api dan senjata tajam, serta mengintimidasi para saksi untuk membuat pernyataan bohong bahwa mereka telah menggunakannya.

234. Para jaksa tidak melihat latar belakang di balik bukti-bukti ini, walaupun sudah sangat jelas bahwa sebagian besar bukti itu direkayasa atau merupakan hasil pemaksaan. Mereka juga tidak mengusut atau mengajukan kepada pengadilan informasi yang tersedia bebas yang menunjukkan bahwa bukti-bukti yang mereka ajukan palsu. Para hakim menerima bukti-bukti ini apa adanya dan tidak mempertanyakannya, walaupun jelas-jelas ada ketidakcocokan, dan samasekali tidak mempertimbangkan materi yang diajukan oleh pembela. Mereka tidak memenuhi tugas mereka untuk menyelidiki ketidakcocokan antara pernyataan yang tertulis dan yang disampaikan secara lisan. Penasihat hukum yang ditunjuk oleh pemerintah gagal mengajukan bukti yang dapat membebaskan para klien mereka dan justru menengahkan argumen yang mendukung kasus jaksa.

235. Dari semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan ini, hanya tim penasihat hukum independen Indonesia yang menunjukkan integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan. Mereka harus bangga atas kontribusi mereka bagi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Indonesia yang mereka sebutkan, dan atas kontribusi mereka untuk mencapai nilai-nilai ini. Pejabat-pejabat lain, polisi, dan militer yang terlibat menunjukkan kecenderungan korupsi dan kolusi, yang meruntuhkan segala harapan tegaknya sebuah sistem peradilan yang dapat memberi keadilan bagi warga negara yang dilayaninya.

236. Motivasi politik untuk menjalankan 'pengadilan sandiwara' ini mencakup empat tujuan yang jelas. Pertama, pengadilan ini menjadi sarana untuk menghukum orang-orang yang mengorganisasi demonstrasi Santa Cruz, melalui mekanisme hukum pidana. Kedua, pengadilan ini mempertontonkan para pemimpin jaringan klandestin yang tertangkap, dan dengan demikian bisa menunjukkan serta mencegah orang-orang lain terlibat dalam kegiatan klandestin. Ketiga, pengadilan ini mendukung versi defensif dari pembantaian Santa Cruz bahwa pembunuhan warga sipil diprovokasi oleh para demonstran; dan, keempat, bahwa reaksi yang tidak semestinya itu hanya melibatkan sedikit anggota militer yang tidak berdisiplin.

237. Dengan mengadakan pengadilan individual alih-alih pengadilan gabungan, Pemerintah Indonesia mampu memperkuat dalam setiap kasus bahwa segala tindakan anti-pemerintah akan dihukum. Dengan mengadakan pengadilan terpisah yang berulan, ancaman yang dibawa oleh para terdakwa akan tampak lebih besar, dan dengan demikian dapat membenarkan aksi-aksi ekstrem militer. Akhirnya pengadilan menciptakan kesan bahwa pengadilan Indonesia telah menegakkan hukum, dan merupakan penjelmaan sayap yudisial pemerintah yang sah dan berdaulat, serta memiliki wewenang penuh untuk memvonis dan menghukum orang-orang yang terlibat dalam kegiatan anti-pemerintah. Semua faktor ini turut menyumbang kepada upaya pihak penguasa Indonesia untuk melegitimasi pendudukan Indonesia atas Timor-Leste.

238. Jelas bahwa harga yang harus dibayar untuk mencapai tujuan politik ini ialah ketidakadilan yang dialami kedelapan terdakwa. Mereka tidak menerima pengadilan yang adil atau proses yang adil, dan dijatuhi hukuman yang amat berat.

239. Hukuman yang dijatuhkan dari tindakan-tindakan yang terkait kejadian Santa Cruz mencakup hukuman penjara seumur hidup bagi para terdakwa orang Timor-Leste untuk kegiatan yang pada dasarnya hanyalah mengorganisasi demonstrasi damai menentang pembunuhan yang disponsori pemerintah terhadap rekan mereka. Hukuman terberat yang dijatuhkan terhadap anggota pasukan keamanan Indonesia, yang terkait dengan pembunuhan lebih daripada 200 warga sipil tidak bersenjata, adalah 18 bulan penjara.

240. Kecacatan besar dalam prosedur pengadilan Santa Cruz di antaranya sebagai berikut:

- Kondisi penahanan pra-sidang di Polda Comoro, termasuk penyiksaan tahanan penduduk sipil, interogasi berkepanjangan dengan sedikit waktu untuk istirahat, dan teknik-teknik yang menghancurkan mental seperti gangguan terhadap keluarga tersangka
- Teknik investigasi, termasuk penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan, ketika mengambil pernyataan tersangka dan saksi, mengorek keterangan yang memberatkan saksi, serta pemalsuan barang bukti
- Kegagalan awal dalam menegakkan hak pendampingan pengacara independen. Walaupun tersangka akhirnya diizinkan menunjuk penasihat hukum mereka sendiri, ini baru terjadi setelah sidang dimulai, yang berarti bahwa pengacara independen tidak dapat hadir pada saat paling penting, yakni ketika investigasi dan interogasi
- Kegagalan dalam menjamin sidang pengadilan yang sepenuhnya terbuka. Walaupun sidang pengadilan secara teoretis terbuka untuk umum, dalam kenyataan banyaknya petugas intelijen dan pendukung mereka yang memenuhi ruang sidang, serta suasana ketakutan yang ditiup-tiupkan oleh penguasa Indonesia, membuat banyak orang Timor-Leste terlalu takut datang dan mengamati jalannya sidang
- Kegagalan dalam menjamin keamanan untuk para calon saksi. Hal ini mencegah calon saksi dari pihak pembela untuk datang memberi keterangan, dan mengakibatkan ketimpangan luarbiasa dalam hal jumlah saksi dari pihak jaksa dibandingkan saksi dari pembela. Selanjutnya, cara persidangan dijalankan tidak memungkinkan penasihat hukum mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif kepada para saksi pihak jaksa dan beberapa saksi pembela yang memberi keterangan
- Intimidasi dan campurtangan terhadap kinerja tim pembela, baik di dalam maupun di luar ruang sidang, disertai pula dengan akses yang minim kepada klien dan waktu yang sempit untuk menyiapkan pembelaan. Walaupun dalam kondisi berat seperti ini, para pengacara dari lembaga bantuan hukum umumnya bekerja dengan mengagumkan, mengajukan submisi-submisi yang mantap dan argumen-argumen yang meyakinkan. Namun demikian, jaksa dan pembela tidak ada dalam posisi yang berimbang sejak awal proses peradilan

- Adanya keberpihakan dan kurangnya kemandirian hakim. Hakim tampak berkolaborasi dengan para petugas intelijen, memimpin proses persidangan dengan memihak jaksa, dan memotong segala pernyataan yang mengkritisi integrasi, yang didapat dari para saksi oleh penasihat hukum. Pernyataan saksi dan bukti tidak dipertimbangkan secara adil, dan hakim sering tampil menggalakkan posisi resmi pemerintah Indonesia, alih-alih bertindak sebagai penengah yang tidak memihak
- Tidak adanya proses banding yang berarti. Walaupun banding dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi di Kupang, penolakan banding oleh Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai proses yang berarti karena tidak transparan dan tidak ada alasan yang diberikan. Keputusan Pengadilan Tinggi di Kupang tampaknya hanya merupakan stempel, yang menyetujui putusan Pengadilan Negeri Dili tanpa pembahasan yang terperinci atas banyak kecacatan prosedur dan substansi dari proses peradilan tersebut. Selanjutnya, dengan penolakan oleh Mahkamah Agung atas semua ajuan kasasi tanpa alasan dalam semua kasus, kecuali satu, tampak bahwa ajuan-ajuan tersebut samasekali tidak diperhatikan
- Hukuman-hukuman yang tidak setimpal. Hukumannya terlalu berat, khususnya jika dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada anggota militer yang telah melanggar tugasnya di lokasi pembantaian

Pengadilan Jakarta 1992

241. Pembantaian terhadap orang-orang sipil di Pemakaman Santa Cruz pada 12 November 1991 dan imbas dari insiden tersebut membuat risau para pelajar dan mahasiswa Timor yang sedang belajar di berbagai kota di Indonesia. Sebagai protes terhadap pembantaian tersebut, para pemimpin pelajar dan mahasiswa mengorganisasi sebuah demonstrasi di Jakarta pada 19 November 1991, untuk membangkitkan kepedulian akan aksi-aksi militer Indonesia dan menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa campurtangan sangat penting dalam menyelesaikan konflik di Timor-Leste.

242. Demonstrasi Jakarta merupakan demonstrasi politik besar-besaran pertama yang digelar oleh pelajar dan mahasiswa Timor-Leste di ibukota negara Indonesia.* Demonstrasi itu menyusul peningkatan aktivitas politik yang terjadi di Timor-Leste, contohnya protes di Tacitolu, Dili, pada saat kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada 12 Oktober 1989 dan demonstrasi di Hotel Turismo pada 17 dan 19 Januari 1990 pada saat kunjungan John Monjo, Duta Besar AS untuk Indonesia.

* Satu aksi sebelum itu di Jakarta, meskipun tidak berhasil, merupakan upaya yang dilakukan oleh sejumlah pelajar dan mahasiswa Timor-Leste untuk memperoleh suaka pada 1987.

243. Pada 19 November 1991, sekitar pukul 10.30, dua kelompok pelajar dan mahasiswa Timor-Leste berkumpul di Jakarta untuk menggelar sebuah demonstrasi secara damai dan tertib. Para demonstran menyuarakan slogan-slogan prokemerdekaan, membentangkan spanduk-spanduk politik, dan mengantarkan petisi kepada Perwakilan PBB serta Kedutaan Australia dan Jepang. Isi dari poster-poster dan petisi tersebut, selain mengenai pembantaian Santa Cruz, juga menyebut persoalan invasi awal dan integrasi paksa Timor-Leste ke Indonesia. Untuk itu para demonstran meminta PBB segera melakukan intervensi. Salah satu poster ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Indonesia:

Mr. Alatas! Masalahnya bukan Pembangunan tapi Invasi dan Penentuan Nasib Sendiri.¹⁵⁷

244. Petisi itu menyatakan bahwa:

Invasi Indonesia atas Timor Timur adalah tindakan tercela dan... invasi dan pendudukan Indonesia atas Timor Timur dapat disamakan dengan invasi Irak atas Kuwait tahun 1991.¹⁵⁸

245. Setelah demonstrasi itu, lima orang pemimpin pelajar dan mahasiswa ditangkap dan disidang karena peranan mereka dalam demonstrasi tersebut: João Freitas da Câmara, Fernando de Araújo (Lasama), Virgilio da Silva Guterres, Domingos de Jesus Bareto, dan Agapito Cardoso. Mereka menghadapi tuduhan subversi atau makar karena menentang integrasi dan memberontak terhadap Pemerintah Indonesia. Analisis berikut ini didasarkan pada dokumen-dokumen pengadilan,¹⁵⁹ wawancara dengan para terdakwa¹⁶⁰ dan pengacara,¹⁶¹ serta sejumlah sumber sekunder.

Penangkapan

Penangkapan di Jakarta

246. Sekitar 100 orang, sebagian besar pelajar dan mahasiswa Timor-Leste, ikut serta dalam demonstrasi pada 19 November 1991 di Jakarta. Para mahasiswa itu sedang menjalani pendidikan di berbagai universitas di kota-kota besar seperti Denpasar, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, Solo, Salatiga, Bandung, dan Jakarta. Polisi menangkap 71 demonstran.

247. Para demonstran ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat. Domingos Barreto menggambarkan situasi menjelang penangkapan:

Kami waktu itu menunjukkan rasa solidaritas kami, bahwa apa yang dilakukan oleh, penembakan yang dilakukan oleh tentara Indonesia di Dili pada 12 November itu, adalah menurut kami adalah suatu pelanggaran sehingga kami melakukan suatu aksi protes terhadap insiden 12 November itu...Kami para mahasiswa yang ada di Jawa, yaitu di seluruh kota besar di Indonesia, mengadakan pertemuan secara

mendadak untuk melakukan suatu aksi, terhadap apa yang terjadi di Dili. Sehingga kami mengadakan pertemuan mulai dari tanggal, 14, 15, dan 16 November, akhirnya pada 19 November 1991 kami melakukan penuntutan aksi kami, dengan melakukan aksi protes, waktu itu kami sampaikan kepada Duta Besar PBB di Jakarta. Setelah kami melakukan aksi demo itu pertama di Kedutaan PBB, kami bertemu utusan dari PBB, dan dia mengatakan bahwa waktu kami disetujui untuk melakukan demo. Sehingga waktu itu kami merasa bahwa apa yang kami ingin sampaikan itu akan terwujud, namun hasil persetujuan yang diberikan oleh utusan PBB itu tidak dilakukan secara tertulis, hanya dilakukan secara lisan. Setelah itu kami melakukan aksi demo di Kedutaan Australia, Jepang, dan kami akan melanjutkan ke Kedutaan Inggris, baru kami ditangkap oleh aparat Kepolisian di Jakarta. Waktu itu bukan dari Polisi saja tapi ada Tim Gabungan yakni Kopassus, Brimob, dan Polda Metro Jaya, jadi tiga komponen yang menangkap kami.¹⁶²

248. Salah satu terdakwa, João Freitas da Câmara, bercerita mengenai penangkapan tersebut:

Kita ditangkap oleh polisi, saya nggak tahu tim apa, yang jelas polisi. Ditangkap di depan Hotel Indonesia [H.I] terus dibawa ke Jakarta Pusat TNI, dekat Carolus, ada pusat kepolisian di sana.”¹⁶³

249. Setelah penangkapan, beberapa tersangka dipukuli. Mereka tidak diberitahu ke mana mereka dibawa dan mengalami interogasi bertubi-tubi dan tidak diberi kesempatan tidur. Domingos Barreto menceritakan hal berikut:

Setelah kami ditangkap, kami langsung dipukuli, beberapa teman terluka di wajah mereka...Lalu selama tiga hari kami semua disekap di suatu tempat yang waktu itu tidak diketahui, kami diperiksa atau diinvestigasi sepanjang waktu – tengah malam, pukul 3 pagi, dan begitulah mereka lakukan sesuka hati mereka sendiri.¹⁶⁴

250. Menurut investigasi yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), penangkapan terhadap para tersangka terjadi dalam konteks penangkapan besar-besaran:

Dalam aksi demonstrasi di Jakarta, yang dijadikan tersangka, dari 71 orang yang ditangkap, hanya 4 orang. Sisanya diberi status penahanannya ditangguhkan setelah penahanan beberapa lama oleh Polda Metro Jaya. Setelah diadakan pemeriksaan yang sangat intensif, seminggu kemudian 49 orang ditangguhkan penahanannya. Kemudian setelah penahanan hampir 120 hari, 18 orang lagi dilepaskan. Sehingga setelah penangguhan penahanan tahap kedua ini, yang masih tetap ditahan dan diperiksa hanya empat orang. Keempat orang itu, ialah: 1. João Freitas da Camara, 2. Virgilio Da Silva Guterres, 3. Agapito Cardoso, dan 4. Domingos Barreto.¹⁶⁵

Penangkapan di Denpasar, Bali

251. Sebagaimana yang terjadi di Jakarta, di Bali juga terjadi penangkapan atas orang-orang yang dicurigai. Pada 24 November 1991 sekitar pukul 6 pagi, pasukan keamanan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah di Denpasar. Dengan mengenakan pakaian tradisional Bali dan tanpa membawa surat perintah resmi, mereka menangkap enam orang mahasiswa: Fernando de Araújo, José Pompeia, Anito Matos, Clemente Soares, Aniceto Guterres Lopes, dan José Paulo.¹⁶⁶ Keesokan harinya, Aniceto Guterres Lopes dan José Paulo dibebaskan karena kehadiran kedua mahasiswa tersebut di tempat kejadian penangkapan dianggap kebetulan.

252. Fernando de Araújo menjelaskan latar belakang dan alasan penangkapannya dan penangkapan terhadap rekan-rekannya di Denpasar:

Saya ditangkap karena saya adalah Sekjen Renetil, sebenarnya karena masalah Renetil. Hal itu berkaitan langsung dengan masalah 12 November Pembantaian Santa Cruz 1991. Setelah pembantaian tersebut pada 19 November 1991, saya mengoordinir teman-teman untuk bikin demonstrasi di Jakarta, di depan kedutaan-kedutaan untuk menentang, memprotes pembantaian 12 November itu. Pada saat itu semua kawan-kawan yang ikut demonstrasi di Jakarta sebanyak 72 [sic] orang yang ditangkap, demikian juga kawan-kawan yang para pengurus Front Klandestin di Dili ditangkap semua. Saya ditangkap pada 24 November 1991 di Denpasar, Bali, di rumah kos saya bersama 5 orang teman.¹⁶⁷

253. Kutipan berikut ini, yang ditulis oleh terdakwa Fernando de Araújo dalam pernyataan pembelaannya, menjelaskan bagaimana sepanjang proses penangkapan tampaknya polisi telah merekayasa bukti-bukti:

Begitu mereka masuk lagi ke kamar Sdr. Clemente Soares, langsung mereka tunjukkan dua buah granat dan dua buah bahan peledak, dan menyita semua dokumen dan surat-surat pribadi yang saya miliki. Karena para pengeledah tadi tidak ada satu pun yang mengerti bahasa Portugis, maka semua tulisan dalam bahasa Portugis diambil semua karena dikira semua itu adalah dokumen, sampai buku-buku yang berbahasa Portugis pun diambil semua.

Pada penangkapan dan pengeledahan rumah, petugas tidak menunjukkan Surat Perintah Penahanan dan Surat Pengeledahan dari Polisi. Saat kami semua berada di ruang tamu, kami diancam akan diborgol semua, dan [mereka] mengatakan bahwa jika kami bergerak maka akan ditembak di tempat.

Pada saat itu juga saya dan teman-teman langsung berdebat dengan mereka, bahwa barang lain boleh kami mengakui milik kami, namun granat dan bahan peledak itu bukanlah milik kami, karena selama ini kami tidak pernah melihat barang tersebut, dan membayangkan

untuk memiliki barang itu pun tidak pernah. Hal ini adalah suatu fitnahan. Petugas sengaja ingin mencelakakan kami dengan tuduhan bahwa di rumah ini kami menyimpan barang-barang terlarang. Dalam perdebatan tersebut para petugas hanya mengatakan bahwa nanti saja kita selesaikan di kantor. Untuk menuju ke Polda Nusra, kami diangkut dengan tiga mobil secara terpisah, dan di Polda kami diinterogasi secara terpisah. Dan pada kesempatan itu juga kami langsung membantah, bahwa granat dan bahan peledak itu bukan milik kami.¹⁶⁸

254. Penangkapan yang dilakukan di Denpasar tampaknya merupakan pelanggaran hukum Indonesia. Penangkapan-penangkapan dilakukan oleh militer, dan tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat perintah penangkapan. Hal ini melanggar pasal 16 dan 18 KUHAP. Dalam penangkapan-penangkapan di Jakarta, dapat dikatakan bahwa surat perintah penangkapan tidak diperlukan karena para tersangka ditangkap pada saat melakukan pelanggaran.

255. Dalam suatu laporan yang dikeluarkan setelah insiden tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendukung pandangan bahwa penangkapan di Bali tidak mengikuti aturan-aturan prosedural yang ditetapkan oleh KUHAP:

Misalnya dalam penangkapan Fernando, petugas yang melakukan bukan dari kepolisian. Dan penangkapan dilakukan tanpa pertamanya memperlihatkan identitas, atau menunjukkan surat perintah penahanan, serta tanpa meninggalkan satu tembusan surat perintah penahanan itu untuk keluarga atau penghuni yang serumah dengan yang bersangkutan, serta [keterangan apapun] tentang tempat di mana dia akan ditahan.

Faktanya adalah Fernando secara mendadak di rumahnya didatangi oleh petugas yang bukan polisi, yang kemudian langsung menggeledah seraya mencari-cari alasan, seolah-olah dia menyimpan granat dan barang-barang yang terlarang lainnya, tanpa ada kesempatan padanya untuk menjelaskan. Singkatnya ia dibawa begitu saja berikut dokumen-dokumen hasil pengeledahan itu, yakni dokumen yang tidak diketahui karena tidak dibuat BAP pada saat itu.¹⁶⁹

Penahanan pra-sidang

256. Setelah polisi melaksanakan investigasi awal terhadap 71 tahanan, muncul tiga kategori: organisator demonstrasi, koordinator, dan mereka yang hanya ikut serta. Beberapa hari setelah penangkapan, sejumlah demonstran dari kategori kedua dan ketiga dibebaskan, sementara mereka yang dianggap bertanggung jawab mengorganisasi demonstrasi tersebut, João Freitas da Câmara, Virgilio da Silva

Guterres, Domingos Barreto, Agapito Cardoso, dan Fernando de Araújo,^{*} tetap ada dalam tahanan di Jakarta dan menunggu persidangan.

Kondisi penahanan di Jakarta

257. Para tersangka ditahan selama kurang-lebih tiga bulan di Jakarta sebelum dibawa ke persidangan. Mereka ada di Markas Besar Polri hanya selama tiga hari dan menghabiskan sebagian besar masa tahanan tiga bulan mereka di Polda Metro Jaya. Para tersangka tidak mengalami penyiksaan fisik namun harus mengalami tekanan psikologis. Selama penahanan, polisi menginterogasi mereka secara bergiliran dari malam sampai sore hari. João Freitas da Câmara menggambarkan situasinya:

Di Polda Metro Jaya, di Polri, juga semalam suntuk saya tidak dibiarkan tidur... Saya sangat capek. Saya duduk saja di kursi dan terus saja di kursi, sampai jam 3-an dini hari. Mereka bawa saya keluar dan jalan-jalan. Dan sambil tanya rumahmu di mana ini. Kemudian saya bilang: uh saya tidak tahu! Saya sudah malas sekali. Malam-malam selalu saya dibawa keluar: "Kita mau ke rumahmu". "Untuk apa?" "Pokoknya mau ke rumahmu". Ya saya tidak mau kasih tahu.¹⁷⁰

258. Domingos Barreto mengalami perlakuan yang sama:

Saya disiksa, dipukul tidak. Tapi penyiksaan yang secara tidak langsung itu dilakukan, misalnya investigasi dilakukan pada jam 12 malam, tengah malam, sampai dengan pagi. Saya kira itu adalah suatu penyiksaan yang dilakukan secara tidak fisik, tapi secara psikologis. Itu menyiksa. Kemudian kita dibangunkan pada jam-jam yang, misalnya pada jam 3. Jam 3 seharusnya orang tidur nyenyak, tapi kita dipanggil satu-satu, kemudian dibawa keluar.¹⁷¹

259. João Freitas da Câmara kemudian menjelaskan secara terperinci mengenai kondisi penahanannya:

Di Polri yang saya merasa itu ada, bukan siksaan fisik, tapi siksaan mental. Itu ada. Karena saya nggak dibiarkan istirahat. Saya sudah capek sekali, dua malam saya nggak dibiarkan tidur. Malam pertama itu mereka tanya terus. Saya jengkel mereka ulang-ulang saja tanya yang sama. Saya sudah diberikan jawaban, mereka tanya terus. Nah, kemudian mereka capek, karena ada beberapa pertanyaan yang diulang-ulang, saya nggak memberikan jawaban., Saya diam saja. Mereka kemudian bosan untuk nanya lagi, kemudian mereka biarkan saya di situ. Ada meja-meja di sekeliling. Jadi mereka semua duduk-duduk di meja itu, main surat/kartu, tapi bikin ribut. Uuuuh... supaya saya nggak istirahat.--- Nggak disiksa secara

^{*} Fernando de Araújo adalah satu-satunya tersangka yang ditangkap di Bali.

fisik, tapi, secara mental, seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi nggak diberi kesempatan untuk istirahat. Jadi pertanyaan, setelah jam mereka balik lagi untuk tanya, kita nggak diberi waktu untuk istirahat, untuk berpikir dan menjawab secara sehat. Itu nggak, jadi itu siksaan mental.---makanan dikasih, kepada saya mereka berikan makanan, cuman makanannya sedikit.¹⁷²

Kondisi Penahanan di Denpasar, Bali

260. Fernando de Araújo, salah satu tersangka yang ditahan di Denpasar, Bali, diperlakukan secara berbeda. Selama interogasi, ia mengalami hal-hal berikut:

Pada saat itu saya ditahan di ruangan yang gelap, besar, dan kotor. Saat itu saya ditahan sendirian, dipisahkan pada saat itu, dan sebelum dimasukkan ke tempat yang penuh dengan nyamuk, kotor sekali itu, saya ditelanjangi, dibuka semua pakaian dan hanya tidur dengan celana dalam. Selama berapa hari itu, hampir satu bulan lebih di Polda Nusra. Jadi setiap malam diperiksa sampai jam 12 malam, diperiksa oleh banyak orang. Orang-orang yang dua minggu pertama itu, tidak jelas orang-orang itu dari mana. Mereka itu intel atau militer, periksa dengan keadaan mau ditembak, pistol taruh di atas kepala, dan saya diperiksa di tempat di mana ada kabel-kabel listrik biasa orang untuk setrum, menyiksa orang di situ. Setelah saya dipulangkan ke tempat sel itu, datang lagi orang-orang seperti preman teriak-teriak di luar, caci maki, bahwa anjing, goblok, bodoh, Timor Timur itu tidak mungkin akan merdeka. Jadi situasi yang luarbiasa, walaupun saya tidak pernah disiksa, tetapi siksaan fisik tidak ada. Tetapi siksaan psikologis/mental itu habis. Saya bilang, bahwa mereka berusaha untuk bikin bregos pada saat itu.¹⁷³

261. Selama penahanan di Denpasar tidak seorang pun mendapatkan akses ke para tahanan, seperti dijelaskan dalam eksepsi Fernando de Araújo:

Selama saya ditahan di Denpasar, yaitu dari tanggal 24 November hingga tanggal 22 Desember 1991, petugas tidak mengizinkan teman-teman saya untuk mengunjungi saya di sel, meskipun mereka telah berusaha untuk minta izin pada jalur-jalur yang formal. Di dalam sel saya dilarang untuk memiliki alat-alat tulis dan bacaan. Pada malam hari sel sering didatangi orang-orang sipil untuk mengancam saya. Selama ditahan di Denpasar saya tidak diperlakukan sebagai tahanan politik. Waktu kami diberangkatkan ke Jakarta, kami diborgol dan baru dibuka setelah kami tiba di ruang Serse Polda Metro Jaya.¹⁷⁴

262. Bentuk-bentuk penganiayaan psikologis yang dialami oleh para tahanan, baik di Jakarta maupun di Denpasar, melanggar jaminan hak-hak asasi manusia fundamental, termasuk hak untuk tidak disiksa. Selanjutnya, meskipun KUHAP Indonesia tidak menjamin standar-standar penahanan yang layak, namun interogasi tanpa didampingi kuasa hukum dan larangan mengunjungi tahanan merupakan pelanggaran terhadap KUHAP.

Akses kepada bantuan hukum

263. Di Polda Metro Jaya, para tersangka tidak diizinkan menghubungi penasihat hukum. Walaupun mereka meminta untuk didampingi kuasa hukum, polisi menolak permintaan mereka. Tidak ada penasihat hukum yang hadir sepanjang proses investigasi dan interogasi, dan ini merupakan pelanggaran kewajiban menurut KUHAP.

Sering saya minta kepada penyidik untuk menelepon LBHI untuk memanggil penasihat hukum; tetapi jawabannya selalu negatif, dengan alasan sebagai berikut: "Saya mau mempercepat proses pemeriksaan supaya cepat dibebaskan. Kalau masih menunggu penasihat hukum makan waktu lama". Maka berhubung dengan banyak teman yang sudah mulai sakit-sakitan, saya terpaksa menerima keadaan itu.¹⁷⁵

264. Berita Acara Pemeriksaan João Freitas da Câmara menyatakan bahwa ia menolak didampingi pengacara pada saat diinterogasi, padahal sebenarnya ia tidak menolak. Berikut ini adalah kutipan dari BAP-nya:

Tanya: Apakah dalam pemeriksaan yang sekarang ini Saudara perlu didampingi oleh Penasihat hukum/Pengacara?

Jawab: Untuk pemeriksaan sekarang ini, saya tidak perlu didampingi oleh Pengacara.¹⁷⁶

265. Dalam dupliknya, João Freitas da Câmara mengatakan:

Pernyataan "Saya tidak perlu didampingi penasihat hukum" adalah pernyataan penyidik, bukan pernyataan saya. Sebab saat-saat sebelum pemeriksaan dimulai, saya telah menyampaikan penolakan saya untuk diperiksa jika penasihat hukum saya tidak dihubungi untuk mendampingi saya dalam pemeriksaan. Hal seperti ini terjadi pada 22 Februari 1992, Sabtu, sekitar jam 17.00 WIB, di mana penyidik dengan alasan untuk menghalangi datangnya penasihat hukum mengatakan sebagai berikut: "teman-teman Anda sedang menunggu di ruangan atas untuk dibebaskan nanti. Kalau Anda bersikap begini, minggu depan keadaan bisa berubah, bisa menghalangi atau memperlambat pembebasan mereka."¹⁷⁷

266. Fernando de Araújo menyatakan:

Ada juga penyidik yang mengatakan, bahwa untuk kasus subversi tidak perlu didampingi penasihat hukum; katanya itu tidak dijamin oleh undang-undang...Pemeriksaan harus cepat-cepat selesai, biar ada titik terang bagi anda [terdakwa]...Penasihat hukum nanti saja mendampingi anda di pengadilan.¹⁷⁸

267. Hukum Indonesia, menurut pasal 54 dan 55 KUHAP, menjamin bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum yang dipilihnya sendiri, mulai dari saat-saat tahap pertama pemeriksaan. Jelas bahwa jaminan fundamental tersebut tidak ditegakkan demi kepentingan para tersangka. Selanjutnya, menurut pasal 56, dalam hal tersangka atau terdakwa tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penasihat hukum wajib ditunjuk.

Investigasi

268. Tampak bahwa Berita Acara Pemeriksaan selama interogasi praperadilan berisi tuduhan-tuduhan palsu. Menurut João Freitas da Câmara:

Ya saya lihat di dalam surat dakwaan itu. Itu ada semua, seperti misalnya hubungan saya dengan Bung Xanana Gusmão. Ada kita punya orang yang datang ke sini terus banyak. Tapi dia bilang saya berhubungan dengan Xanana Gusmão di hutan. Saya dikasih instruksi dari Xanana Gusmão untuk berbuat ini, berbuat itu, dan bilang saya ini adalah ketua Renetil. Padahal saya ini, saya nggak jadi ketua Renetil. Dan banyak hal yang mereka karang, jadi itu untuk memberat-beratkan saya.¹⁷⁹

269. Para terdakwa kemudian dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan yang tidak akurat, seperti dijelaskan oleh Fernando de Araújo:

BAP, dipaksa untuk tanda tangan, dengan alasan sidang itu mau jalan dan mereka jadi saya dalam keadaan frustrasi; ya saya tanda tangan, dengan pertimbangan juga bahwa ya sebaiknya itu kasusnya diajukan ke sidang terbuka, agar kita bisa bikin kampanye politik.¹⁸⁰

270. Fernando de Araújo mengangkat permasalahan ini dalam eksepsinya:

Pada tanggal 27 April 1992 saat saya diperiksa (pemeriksaan terdakwa), saya mengatakan di depan Majelis Hakim bahwa apa yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan lebih banyak yang tidak benar, karena saya tidak didampingi oleh penasihat hukum. Maka pada saat saya diperiksa oleh kepolisian dan kejaksaan, saya dipaksa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan, walaupun saya tidak pernah tahu dan tidak pernah melakukan apa yang ditanyakan.¹⁸¹

271. Pendekatan oleh para penyidik dan interogator dalam memaksa para terdakwa untuk menandatangani keterangan palsu jelas melanggar pasal 117 KUHAP yang menjamin “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.” Tindakan tersebut juga melanggar pasal 52 KUHAP yang memberikan kepada para tersangka atau terdakwa “hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Selain sangat tidak etis, sejak awal tindakan ini telah sangat mengurangi kemungkinan sebuah pengadilan yang adil. BAP memainkan peranan yang penting dalam sidang pengadilan di Indonesia karena BAP menyediakan dasar faktual untuk dakwaan. Adanya perbedaan antara keterangan langsung yang diberikan dalam ruang sidang dan keterangan yang tercatat di dalam BAP harus diselidiki oleh hakim dan dicatat. Pernyataan palsu yang didapat selama proses interogasi tetap menjadi landasan faktual persidangan.

Persidangan

Dakwaan

272. Para terdakwa utama, João Freitas da Câmara dan Fernando de Araújo, dituntut dengan dakwaan subversi menurut Undang-Undang Anti-Subversi, dan dakwaan subsidi menurut KUHP. Tiga terdakwa yang lain dikenai Pasal 154 KUHP untuk tindak pidana mengganggu ketertiban umum.

*Dakwaan terhadap João Freitas da Câmara*¹⁸²

273. Dakwaan primer terhadap João Freitas da Câmara ialah bahwa ia telah melanggar Pasal 1(1)(1)(b) dan Pasal 13(1) Undang-undang Anti-Subversi (UU No.11/PNPS/1963), yaitu terlibat dalam tindakan-tindakan yang ditujukan untuk atau dapat menggulingkan, menghancurkan, atau melemahkan kekuasaan Negara, penguasa pemerintahan yang sah, atau perangkat Negara. Dakwaan tersebut menuduhnya melakukan tindak-tindak pidana, yang tidak dijelaskan, dalam gerakan klandestin dari 1983 sampai 19 November 1991 “atau pada waktu-waktu di mana hari, tanggal, dan bulan tidak dapat ditentukan secara pasti”, dan melakukan kegiatan tersembunyi yang tidak diperinci, setidaknya di lima lokasi di Jakarta dan dalam bentuk pertemuan, forum, pertunjukan publik, dan demonstrasi menggunakan spanduk-spanduk, poster, dan deklarasi. João Freitas da Câmara dituduh telah melakukan atau terlibat dalam berbagai tindak pidana yang masih berlangsung, sehingga jaksa penuntut berupaya mengaitkan kejadian akhir-akhir ini (demonstrasi pada 19 November 1991) dengan kegiatan-kegiatan tersangka atau terdakwa dalam gerakan klandestin, yang tampaknya telah dimulai sejak 1983 atau 1984.

274. Sejumlah tuduhan faktual dituduhkan terhadap João Freitas da Câmara. Tuduhan-tuduhan tersebut meliputi tindakannya menyetujui untuk menerima informasi dari Timor-Leste dan mengirimkan informasi tersebut ke luar negeri kepada organisasi-organisasi seperti ACFOA (Australian Council for Overseas Aid; Dewan Australia untuk Bantuan Luar Negeri) di Melbourne, Australia, dan

Amnesty International di London, Inggris. Ia juga dituduh menerima dana dari organisasi-organisasi tersebut dan organisasi sejenis lainnya. Informasi yang ia sebarakan dianggap menyebarkan rasa permusuhan, perlawanan, dan kekhawatiran, dan berasal dari sumber-sumber yang anti-pemerintah serta fakta-fakta yang tidak ia konfirmasi terlebih dulu dengan pihak-pihak berwenang yang kompeten. Dituduhkan pula bahwa pada 20 Juni 1988, sebuah organisasi bawahan yang disebut Renetil (Resistencia Nacional dos Estudantes de Timor-Leste) dibentuk di Denpasar, Bali, dipimpin oleh Fernando de Araújo, dengan terdakwa sebagai pemimpin cabang Jakarta. Juga terdakwa menggunakan setiap kesempatan untuk mempertunjukkan dan membagi-bagikan deklarasi dan petisi kepada tamu-tamu asing di Indonesia. Akhirnya, sebagai presiden Renetil di Jakarta dan pemimpin Movimento Nacional dos Estudantes Timor-Leste, João Freitas da Câmara dituduh menggunakan dalih solidaritas sesama manusia untuk peristiwa 12 November 1991 sebagai upaya menutupi maksud sebenarnya, yakni mendapatkan simpati dunia untuk kepentingan kampanye politiknya, yaitu melihat Timor-Leste bebas dari Indonesia. Dakwaan lebih lanjut terhadapnya memerinci pengagasan, perencanaan, dan pelaksanaan demonstrasi tersebut pada 19 November 1991.

275. Dakwaan subsider pertama terhadap João Freitas da Câmara ialah menyebarkan rasa permusuhan atau membangkitkan permusuhan, atau menyebabkan perpecahan, konflik, kekacauan, gangguan, atau kegelisahan di antara penduduk atau masyarakat yang lebih luas, atau antara Indonesia dan negara sahabat. Dakwaan subsider kedua ialah bahwa terdakwa menyatakan secara terbuka perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

*Dakwaan terhadap Fernando de Araújo*¹⁸³

276. Fernando de Araújo dituduh sebagai Presiden Renetil (Resistencia Nacional dos Estudantes de Timor-Leste) dan menghadapi dakwaan-dakwaan primer dan subsider yang sama dengan dakwaan atas João Freitas da Câmara. Ia juga didakwa dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana yang terus berlangsung, didasarkan pada tuduhan-tuduhan faktual, dimulai pada 1986.

277. Ringkasan dari berbagai tuduhan faktual terhadap Fernando de Araújo ialah sebagai berikut. Pada 1986 di Denpasar, Bali, Fernando de Araújo menerima perintah dari Xanana Gusmão, yang menyerukan kepada muda-mudi Katolik Timor-Leste di Indonesia untuk mengatur dan membentuk perkumpulan-perkumpulan dengan tujuan melanjutkan perjuangan membebaskan Timor-Leste dari Indonesia. Terkait dengan hal ini, tersangka menerima telepon dari José Ramos-Horta di Australia. Pada 20 Juni 1988 di Bali, terdakwa hadir di sebuah pertemuan yang menghasilkan terbentuknya Renetil, dan kemudian terpilih sebagai ketuanya pada kongresnya yang pertama. Dari 1988 hingga 1991, Fernando de Araújo mendirikan banyak cabang Renetil di seluruh Jawa dan menjadi penghubung untuk informasi mengenai Timor-Leste, yang diberikan oleh Constancio Pinto atau oleh Xanana Gusmão, kepada dunia luar dan cabang-cabang Renetil. Surat dakwaannya memerinci sejumlah pertemuan

dan komunikasi Renetil. Selain itu, terdakwa dituntut menerima dana dan obat-obatan dari luar negeri, dan menyalarukannya melalui jaringan klandestin.

278. Pada 12 November 1993, Constancio Pinto memberitahukan kepada Fernando de Araújo mengenai pembantaian di Perkuburan Santa Cruz dan memerintahkannya mengorganisasi sebuah demonstrasi di Jakarta. Pada pukul 13.00, Fernando de Araújo menghubungi João Freitas Da Câmara, ketua cabang Renetil di Jakarta, melalui telepon dan memberinya instruksi antara lain untuk memberitahu media dan kedutaan asing di Jakarta, ACFOA, dan Amnesty International, mengenai apa yang telah terjadi di Dili. Instruksi selanjutnya dari Fernando ialah untuk menggelar sebuah demonstrasi, menggunakan spanduk-spanduk dan poster di depan Kantor Perwakilan PBB serta Kedutaan Jepang dan Australia, dan menghubungi cabang-cabang Renetil yang lain agar mereka mengirim orang-orang sebagai demonstran.

279. Fernando de Araújo menuduh bahwa dakwaan terhadapnya berisi tuduhan-tuduhan palsu. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah menerima surat terbuka dari Xanana Gusmão atau menindaklanjuti hal tersebut.

280. Seperti pengadilan-pengadilan politik lainnya yang digelar pada masa pendudukan Indonesia, persidangan Jakarta didasarkan pada dakwaan-dakwaan yang pada dasarnya sudah tidak adil menurut Undang-Undang Anti-Subversi dan KUHAP. Selanjutnya, dakwaan terhadap para terdakwa di persidangan Jakarta menggambarkan beragamnya pilihan yang ada bagi jaksa penuntut umum yang hendak menuntut dan menghukum tidak hanya terhadap protes-protes damai terbuka, tapi juga terhadap pertemuan-pertemuan para pelajar dan mahasiswa Timor-Leste yang membahas situasi di kampung halamannya. Yang juga patut dicatat ialah kurangnya perincian mengenai tuduhan aktivitas klandestin jangka panjang atas terdakwa, yang tetap samar dan tidak dapat dibuktikan. Tuduhan-tuduhan meliputi masa hingga sepuluh tahun, dan sering tidak berisi perincian mengenai tanggal, tempat, dan orang-orang yang terlibat.

Kondisi ruang sidang

281. Semua tersangka atau terdakwa diadili secara terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan terhadap mereka berlangsung antara dua sampai enam bulan. Sebelum persidangan, para tersangka ditahan di Rutan Salemba dan Cipinang di Jakarta, dan dibawa ke gedung pengadilan dengan pengawalan ketat. Pada awal persidangan, hakim menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum. Meskipun demikian, pengunjung yang diizinkan memasuki ruang sidang hanyalah intel, polisi, atau militer, yang semuanya merupakan bagian dari pasukan keamanan Indonesia, sehingga pengadilan tampak seolah-olah terbuka, tapi pada kenyataannya tidak.

282. Menurut Fernando de Araújo, maksud kehadiran pasukan keamanan Indonesia sebagian ialah untuk mengintimidasi para terdakwa:

Situasi pada saat sidang, polisi penuh, militer-militer yang berseragam, yang tidak berseragam juga penuh di situ. Mereka datang menampakkan

*diri pada saat sidang sebelum dimulai. Selama sidang dan pada akhir sidang, mereka di belakang, di dalam ruangan sidang, dengan alasan keamanan. Tetapi teror, intimidasi, yang mereka lakukan terhadap kita. Seperti saya bilang, mereka akan hancurkan kepala, atau kamu harus divonis dengan hukuman yang berat dan macam-macam.*¹⁸⁴

283. Menurut pasal 153(3) KUHAP, proses persidangan harus terbuka untuk umum. Hal ini jelas tidak terjadi pada pengadilan-pengadilan di Jakarta itu, dan sesuai dengan hal tersebut, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan seharusnya dibatalkan menurut Pasal 153(4).

Saksi

284. Seperti persidangan-persidangan sebelumnya, terdapat ketimpangan di mana jumlah saksi sangat menguntungkan pihak jaksa penuntut umum. Bahkan Komisi tidak mengetahui adanya seorang pun saksi meringankan yang memberi kesaksian. Selanjutnya sejumlah besar saksi yang memberatkan ialah juga para tahanan atau mantan tahanan yang segera akan diadili atau yang pernah atau sedang ditahan, karena dicurigai melakukan suatu tindak pidana terkait dengan demonstrasi Jakarta. Menurut João Freitas da Câmara:

*[Para] saksi itu diambil dari tujuh puluh teman-teman tahanan. Sebagian besar sudah dilepas, tinggal tersisa kami duapuluh dua orang. Kemudian banyak [dari mereka] juga dilepas, sehingga tinggal kami lima orang. Pada persidangan, tujuhbelas orang dipanggil kembali sebagai saksi, dan kami satu sama lain saling memberikan kesaksian tentang sesama kami.*¹⁸⁵

285. Pasal 65 KUHAP memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mencari dan mengajukan saksi. Melihat tidak adanya satu pun saksi meringankan, terdapat indikasi yang kuat bahwa ketentuan ini telah dilanggar.

Bukti

286. Banyak sekali bukti fisik, yang diperoleh pada saat dan setelah demonstrasi, diajukan kepada pengadilan. Di antaranya disebutkan:

Spanduk, petisi, yang dibawa para terdakwa saat demonstrasi, dan [bukti] menerima bantuan-bantuan finansial serta pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh para terdakwa. Bukti yang diajukan mengenai peranan mereka sebagai pimpinan organisasi klandestin mahasiswa, seperti Renetil, dan mengenai hubungan mereka dengan tokoh-tokoh perjuangan Timor Timur.¹⁸⁶

287. Contoh lain dari bukti fisik yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, diperoleh dari persidangan kasus Virgilio da Silva Guterres:

[Satu] turunan petisi/deklarasi tertanggal 18 November 1991 yang berjudul *Declaracao Do Movimento Nacional Dos Estudantes De Timor-Leste Na Indonesia*; poster-poster ditulis di atas kertas manila warna kuning, yang berbunyi antara lain: “Kami saksi kekejaman Indonesia selama 16 tahun”; “integrasi berarti pembinasaaan samasekali rakyat kami”; “Tuan Alatas! Masalahnya bukan pembangunan, tapi invasi dan penentuan nasib sendiri”; “Di mana para martir kami? Kami mau mengubur mereka menurut tradisi kami”; “Lebih baik mati ketimbang integrasi!”¹⁸⁷

Kinerja pengacara

288. Setelah pada awalnya ditolak haknya untuk didampingi kuasa hukum pada saat sidang, para terdakwa didampingi oleh satu tim pengacara dari YLBHI-IKADIN, Jakarta. Kedua institusi tersebut membentuk satu tim yang disebut Komite Bersama untuk Timor-Leste, dengan tujuan memberi bantuan hukum kepada para terdakwa orang-orang Timor di Dili dan Jakarta. Seperti pengadilan-pengadilan politik lain, para pengacara dihambat dan dicegah membela kliennya tanpa campurtangan. Melihat situasi politik di Indonesia pada saat itu, membela terdakwa orang-orang Timor adalah hal yang kontroversial dan bisa berbahaya. Namun demikian, meskipun banyak gangguan terhadap kerja mereka dan perlakuan tidak adil oleh militer Indonesia, tim pembela terus membela orang-orang Timor yang menjadi terdakwa.

289. Menurut Fernando de Araújo:

*Pengacara dari LBH-Jakarta, sepertinya akhir Februari 1992, mereka biasa kunjungi kami di penjara; dan tim pengacara untuk saya itu dikoordinir oleh Bapak Luhut Pangaribuan, S.H., LL.M. Saya sangat mengagumi orang itu. Dia sangat baik, walaupun pada saat itu dia sendiri takut, karena pemerintah militer yang menentukan semuanya. Tetapi dari segi perjuangan hak klien untuk ngomong, untuk menulis pleidoi, itu mereka perjuangkan.*¹⁸⁸

290. Menurut João da Camara:

*Peranan pengacara itu berusaha untuk membela kami, untuk membela posisi mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang masih muda, sebaiknya itu diberi pertimbangan untuk kembali ke kampus untuk melanjutkan studi, jangan diberikan hukuman yang berat. Sedangkan dari pihak jaksa itu kecenderungan mereka itu memberatkan.*¹⁸⁹

291. Komisi memuji integritas dan keberanian yang diperlihatkan oleh para pengacara lembaga bantuan hukum Indonesia, yang membela klien-klien mereka dengan tidak kenal lelah, tanpa menghiraukan kondisi yang sangat berbahaya. Khususnya Luhut Pangaribuan harus dipuji untuk komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar Indonesia ketika berhadapan dengan tindakan-tindakan yang ilegal, amoral, dan intimidasi yang diatur oleh para anggota pasukan militer.

Isi pembelaan

292. Pada umumnya argumentasi yang diajukan oleh para terdakwa di dalam pernyataan pembelaan mereka ialah bahwa isu-isu hak asasi manusia dan hukum internasional harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan. Mereka menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk menggelar suatu protes damai, dan tidak boleh dihukum karena hal ini. Mereka juga bersandar pada prinsip-prinsip hukum internasional yang menunjukkan bahwa pendudukan Indonesia atas Timor-Leste adalah ilegal, pada keabsahan yang meragukan dari praktik mengadili orang-orang Timor-Leste di suatu pengadilan Indonesia, serta pada hak Portugal atas wilayah Timor-Leste.¹⁹⁰

Putusan dan Vonis*

293. João Freitas da Câmara dan Fernando de Araújo didakwa bersalah atas subversi sebagai suatu tindakan yang terus menerus. Mereka masing-masing divonis sepuluh dan sembilan tahun penjara. Terdakwa yang lain, Virgilio da Silva Guterres dan Domingos Soares Baretto, diputuskan bersalah atas tindak pidana mengganggu ketertiban umum menurut Pasal 154 KUHP, karena secara terbuka menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia. Virgilio da Silva Guterres dihukum penjara 2 tahun 6 bulan; Agapito Cardoso, sepuluh bulan; dan Domingos Soares Barreto, 6 bulan.

Banding

294. João Freitas da Câmara, Fernando de Araújo, Virgilio da Silva Guterres, dan Agapito Cardoso menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, untuk peninjauan ulang keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

295. Permohonan banding João Freitas da Câmara didasari atas sejumlah alasan: pertama, bahwa Pengadilan Indonesia tidak berwenang memutuskan perkaranya; dan kedua, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar hukum yang berlaku saat itu, karena pengadilan tersebut mengabaikan esensi dan tujuan KUHP, yaitu mencari kebenaran material dan menegakkan hak-hak pemohon banding. Dengan tegas, para pengacara João Freitas da Câmara memberikan alasan yaitu:

* CAVR tidak memiliki dokumen putusan-putusan pengadilan.

1. Bahwa semua dakwaan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi tidak berdasar, tidak terbukti, dan tidak sah; karena semua tindakan yang telah Pemohon Kasasi lakukan merupakan hak Pemohon Kasasi sebagai bagian dari rakyat Timor Timur, sebagai protes atas terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia yang besar-besaran di Timor Timur oleh pemerintah dan aparaturnya serta ABRI; hal ini telah diakui secara sah dan legal oleh PBB dalam resolusi-resolusinya yang dikeluarkan sejak tahun 1975 hingga tahun 1982;
2. Bahwa Undang-Undang No. 7 tahun 1976 tentang Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara RI tidak sah secara hukum karena tidak mencerminkan aspirasi rakyat Timor Timur; jadi tepatnya aneksasi bukan integrasi; dan bahwa Undang-Undang No. 7 tahun 1976 merupakan hasil manipulasi politik pemerintah Jakarta, setelah wilayah Timor Timur dianeksasi ke dalam Negara Kesatuan RI. Dengan demikian pemerintah Indonesia telah melanggar prinsip dasar negaranya, yang dinyatakan tegas dalam Mukadimah, dan melanggar sila kedua dan kelima dari Pancasila, yang telah menyorot, menindas rakyat Timor Timur.¹⁹¹

296. Pada 30 Juli 1992, Pengadilan Banding di Jakarta menolak permohonan banding João Freitas da Câmara.¹⁹² Pada 29 Oktober 1992, João Freitas da Câmara mengajukan permohonan banding kepada Mahkamah Agung Indonesia. Pada 27 Februari 1993 Mahkamah Agung menolak permohonan ini dengan alasan bahwa keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Banding belum dibuktikan. Dasar atau alasan untuk keputusan ini tidak diberikan.

297. Permohonan banding oleh Fernando de Araújo kepada Pengadilan Tinggi didasarkan pada berbagai alasan berikut: Pertama, hak terdakwa untuk memperoleh akses kepada bantuan hukum pada saat investigasi telah diingkari meskipun bantuan hukum diwajibkan menurut hukum dalam kasus-kasus berat semacam ini. Kedua, meskipun sejumlah saksi tidak hadir pada saat persidangan, BAP mereka dihadirkan sebagai bukti oleh jaksa penuntut umum. Terakhir, dakwaan terhadapnya didasarkan pada Undang-undang Anti-Subversi, yang menurutnya tidak konstitusional. Permohonan bandingnya ditolak tanpa alasan.

298. Virgilio da Silva Guterres juga mengajukan permohonan banding yang sama kepada Pengadilan Tinggi dan permohonan tersebut ditolak tanpa dasar. Pada 30 Januari 1993, permohonan banding yang diajukannya kepada Mahkamah Agung juga ditolak. Dalam permohonannya, terdakwa meminta agar putusan pengadilan sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila, serta tunduk terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB. Mahkamah Agung menolak semua keberatan yang diajukan oleh pemohon banding tersebut.

299. Agapito Cardoso secara spesifik mengajukan banding atas hukuman sepuluh bulan penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menganggap

hukuman tersebut tidak adil, tidak sepadan, dan tidak obyektif. Dalam permohonan banding, ia lebih lanjut menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih memilih “praduga bersalah” daripada “praduga tidak bersalah”; dan bahwa Pengadilan Negeri lebih tertarik untuk mengetahui apakah para terdakwa merupakan penerima beasiswa dari pemerintah daripada untuk mengetahui hubungan mereka dengan demonstrasi tersebut. Permohonan banding oleh terdakwa juga menyatakan bahwa para hakim tidak menghiraukan alasan-alasan mengapa demonstrasi itu digelar, dan lebih memilih untuk membandingkan taraf pembangunan selama masa Portugis dengan pembangunan pada masa pendudukan Indonesia. Seperti halnya permohonan-permohonan banding yang lain, permohonannya juga ditolak.

Kesimpulan

300. Terdapat banyak kesamaan antara pengadilan terhadap para aktivis Timor-Leste yang diseret ke pengadilan karena demonstrasi di Jakarta, dan mereka yang diadili terkait dengan demonstrasi di Dili. Kecacatan dan pelanggaran prosedur utama terhadap standar-standar hukum internasional dan bagian-bagian tertentu dari KUHAP yang berlaku terjadi dalam dua seri persidangan tersebut. Dalam kedua situasi ini, tampak jelas dari berbagai penyelidikan yang dilaksanakan oleh Komisi bahwa persidangan-persidangan tersebut diatur dan digelar bukan karena keinginan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan keadilan, tetapi lebih untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Rekayasa bukti, pemutarbalikan terhadap jawaban yang tercatat dalam BAP, bukti palsu yang diberikan oleh para petugas pasukan keamanan, pencegahan yang dipaksakan terhadap saksi meringankan agar tidak hadir, merupakan upaya-upaya yang dirancang untuk mencapai hasil akhir yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, yakni vonis dan penghukuman seberat-beratnya terhadap para terdakwa.

301. Pelanggaran prosedur berikut terjadi sepanjang persidangan Jakarta:

- Kondisi-kondisi pra-sidang tidak melibatkan penyiksaan fisik, meskipun semua terdakwa mengeluh mengenai penggunaan pengurangan tidur sebagai alat interogasi. Harus dipahami benar-benar bahwa hal ini dapat merupakan bentuk penyiksaan. Memaksa subyek yang diinterogasi untuk tidak tidur dalam jangka waktu yang lama merupakan pengalaman yang sangat traumatik, yang dampaknya tidak dapat dianggap remeh karena tidak meninggalkan bekas fisik. Perlakuan yang terjadi lebih parah lagi dalam kasus Fernando de Araújo, yang ditempatkan dalam sebuah sel gelap tanpa mengenakan pakaian, dan diinterogasi dengan menghadapi alat-alat penyiksa yang digunakan untuk memberikan kejut listrik, serta diancam di bawah todongan senjataapi penuh peluru ke kepalanya. Semua tindakan ini merupakan distorsi proses hukum yang melampaui batas, yang menghancurkan harapan apapun atas suatu proses pengadilan yang sah dan didasarkan atas bukti serta kesaksian yang diambil dalam kondisi ini.
- Sejumlah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan praktik-praktik praperadilan yang tidak sah dan tidak sesuai hukum ini mengarahkan para

terdakwa untuk memberikan informasi tertentu kepada interogator mereka. Karena sejumlah jawaban itu merupakan hasil dari praktik-praktik yang tidak layak, hasil wawancara itu pun tidak dapat dijadikan sandaran dalam persidangan. Terlebih lagi aspek-aspek penting dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak mencerminkan informasi yang telah diberikan oleh para terdakwa, melainkan merupakan rekayasa tertulis yang dibuat oleh para interogator.

- Persidangan-persidangan itu digelar dalam kondisi-kondisi yang tidak terbuka untuk umum, oleh karena itu tidak hanya melanggar standar-standar hak asasi manusia internasional tetapi juga ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.
- Kuasa hukum tidak dapat melakukan pekerjaan mereka secara bebas dan secara profesional karena intimidasi yang dilakukan oleh agen-agen militer Indonesia. Mereka dialangi untuk melakukan penyelidikan terhadap sesuatu yang relevan untuk pembelaan terhadap klien mereka. Walau demikian kuasa hukum yang independen ini harus dipuji untuk dedikasi dan komitmen mereka demi nilai-nilai keadilan.
- Tidak ada saksi meringankan yang dipanggil dalam sidang-sidang tersebut. Intimidasi terhadap calon saksi menyimpangkan proses pengadilan ke suatu tahap di mana pengadilannya tidak lagi dapat disebut sebagai pengadilan bebas dan adil, karena tidak ada cara untuk mengetahui bukti apa yang bisa diperoleh dari para saksi tersebut kalau saja mereka tidak secara paksa dicegah menghadiri persidangan.
- Para anggota pasukan keamanan merekayasa bukti dan berkolusi dalam memberikan bukti palsu ke hadapan sidang
- Hak para terdakwa untuk naik banding secara praktis diingkari, karena kekuatan argumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak terdakwa dalam proses banding samasekali tidak dipertimbangkan. Dengan demikian, serupa dengan persidangan-persidangan kasus Santa Cruz, proses banding hanyalah sekadar “memberi stempel” putusan sidang pengadilan, yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan politik.

Pengadilan Xanana Gusmão

302. Para pejabat Indonesia yang berwenang beranggapan bahwa penangkapan terhadap Komandan Falintil, Xanana Gusmão, pada November 1992, sebagai suatu peristiwa bersejarah dalam kampanye mereka untuk menundukkan Timor-Leste. Dari penangkapan hingga penahanannya di Bali dan Dili, berlanjut dengan pengadilan dan tuntutan peristiwanya, mereka mencoba menguasai dan memanipulasi proses tersebut untuk menimbulkan efek propaganda sebesar-besarnya. Militer Indonesia telah siap dengan seorang juru kamera untuk merekam penangkapannya, yang kemudian disiarkan ke seluruh Indonesia. Ketika di dalam tahanan, Xanana

Gusmão dipaksa memberikan beberapa wawancara. Media Indonesia mengikuti peradilannya dari awal sampai akhir, dan menyediakan peliputan yang disensor secara ketat.¹⁹³

303. Komisi tidak berhasil memperoleh dokumen-dokumen sidang untuk pengadilan Xanana Gusmão, sehingga analisis terhadap kasusnya sangat bergantung pada cerita-cerita dan dokumen tangan kedua, khususnya sebuah laporan pengadilan yang disusun oleh *Asia Watch*, beserta laporan-laporan dan artikel-artikel koran. Komisi melakukan wawancara dengan Xanana Gusmão sendiri dan menganalisis dokumen-dokumen yang tersedia, seperti pernyataan pembelaan Xanana Gusmão dan sebuah surat yang ia tulis untuk Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ). Sumber-sumber tersebut menjadi dasar untuk analisis di bawah ini.

Prasidang

Penangkapan

304. Xanana Gusmão ditangkap pada pagi hari 20 November 1992 oleh anggota angkatan bersenjata Indonesia. Pada waktu itu ia bersembunyi dalam sebuah ruang yang dibuat khusus, yang hanya bisa dimasuki melalui sebuah pintu tingkap yang tersembunyi di bawah lemari di rumah Augusto Pereira di Lahane, Dili.¹⁹⁴ Menurut penuturan Xanana Gusmão, beberapa petugas intelijen tiba pada pukul 4 dini hari:

*Dan saya juga ada tiga alternatif yaitu: menyerahkan diri, membunuh diri, atau melakukan perlawanan. Menyerahkan diri, saya yang memegang tali kendali perang, berarti masih ada waktu untuk bicara; bunuh diri, jika saya sebagai seorang pencuri, masalah saya sudah diselesaikan; melakukan perlawanan, semua masyarakat yang ada di sekeliling yang tidak berdosa akan jadi korban. Untuk itu mereka datang menangkap, saya bilang, saya di sini.*¹⁹⁵

305. Dari rumah tersebut, Xanana Gusmão segera dibawa ke rumah Brigadir Jenderal Theo Syafei, Komandan Kolakops (Komando Pelaksana Operasi).¹⁹⁶ Kemudian pada hari yang sama, ia diterbangkan ke Bali; di sana ia ditahan di Markas Besar Komando Daerah Militer (Kodam) selama tiga hari tiga malam.¹⁹⁷

306. Xanana Gusmão menggambarkan penangkapannya:

*Surat penangkapan, hal ini kita tidak perlu mengangkatnya sebagai masalah, karena ini adalah operasi dan saya adalah Komandan Gerilya. Tapi mereka menangkap saya dengan baik-baik [hormat], kalau tangkap dengan kuat, ini hal lain, karena mereka takut saya melarikan diri.*¹⁹⁸

307. Tampaknya Xanana Gusmão ditangkap sebagai seorang sipil dan bukan sebagai seorang tawanan perang. Tidak terdapat formalitas prosedural seperti

memperlihatkan surat perintah penahanan yang sah. Perekaman film penangkapan Xanana Gusmão, dan adanya bukti bahwa keberadaan Xanana Gusmão telah dibocorkan oleh seorang informan sipil, menunjukkan bahwa militer punya waktu untuk merencanakan penangkapan tersebut. Maka jika mereka memang mau, mereka dapat mengurus formalitas hukum yang semestinya.¹⁹⁹

308. Buntut dari penangkapan Xanana Gusmão ialah penangkapan terhadap sejumlah kerabat dan rekan-rekannya. Sampai dengan 4 Desember 1992, sekitar dua minggu setelah penangkapannya, setidaknya 20 rekan terdekat dan kerabatnya dilaporkan ada dalam penahanan.²⁰⁰ Sembilan anggota keluarga, termasuk saudara perempuannya beserta suami dan dua orang anaknya, ada di antara mereka yang ditahan.²⁰¹ Amnesty International menduga bahwa beberapa dari mereka yang ditahan di Dili menjadi sasaran penganiayaan dan penyiksaan berat.²⁰² Berbagai penangkapan ini memperkuat pengaruh yang bisa digunakan oleh para pejabat Indonesia yang berwenang terhadap Xanana Gusmão, ketika mereka menekannya untuk membuat berbagai pernyataan dan bekerja sama selama penyidikan.

Penahanan prasadang

309. Selama 17 hari pertama dalam penahanan, Xanana Gusmão tidak diizinkan berhubungan dengan dunia luar. Karena tempat penahannya tidak diketahui, muncul kekhawatiran akan keselamatannya; dan ketiadaan informasi menimbulkan spekulasi mengenai perlakuan terhadapnya.²⁰³ Selama jangka waktu ini, Xanana Gusmão tidak diizinkan berhubungan dengan keluarga atau pengacaranya.²⁰⁴ Hal ini berakhir pada 7 Desember 1992, ketika ia diizinkan dikunjungi oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Kunjungan ini merupakan puncak dari tekanan internasional yang cukup kuat dan perundingan tingkat tinggi antara PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia, dan ICRC.²⁰⁵ Kunjungan itu dilakukan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jakarta.²⁰⁶

310. Setelah kunjungan tersebut, baru diketahui bahwa Xanana Gusmão selama waktu itu telah dipindahkan dari Bali ke tahanan Kopassus di Jakarta sebelum dibawa ke Mabes Polri.²⁰⁷ Ia mengatakan kepada Komisi bahwa ia mengalami perlakuan yang paling buruk selama tiga harinya di Bali. Larangan tidur biasa digunakan:

Metode pertama, yang saya ada di Bali, mereka tidak memberi saya kesempatan untuk tidur; [jika] siang saya mengantuk juga, mereka berteriak; juga sebaliknya, [jika] malam mengantuk, juga mereka berteriak. Mereka berbicara dengan saya jam 2 malam, itu saya masih ingat, [Brigadir Jenderal] PT4, karena saya sudah mengenalnya pada tahun 1983. Waktu itu dia mayor. Jadi dia bicara mengenal itu dan ini. Dia memukul meja, saya juga memukul meja; kami saling memukul meja!²⁰⁸

311. Tampaknya bahwa semasa penahanan awal ini larangan tidur digunakan untuk memperoleh informasi dan memaksa Xanana Gusmão membuat berbagai pernyataan positif mengenai keberadaan Indonesia di Timor-Leste:

Saya masuk tiga hari, tiga malam, tidak ada kesempatan untuk tidur; saya takut, jangan sampai kehilangan kesadaran dan saya mengakui integrasi lebih baik. Saya [pikir] lebih baik pindah kepada satu tempat yang lebih baik, agar tetap meningkatkan kekuatan.²⁰⁹

312. Perlakuan selama penahanan prapersediaan semacam ini merupakan suatu pelanggaran serius terhadap hukum Indonesia. Menurut Pasal 59 KUHAP, keluarga tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahu tentang penahanan atas dirinya (oleh pejabat yang berwenang) pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Jelas hal ini tidak dilakukan pada waktu itu, karena tidak seorang pun mengetahui tempat penahanan Xanana Gusmão selama 17 hari. Tersangka juga berhak menerima kunjungan sanak keluarganya (Pasal 60 dan 61), dokter (Pasal 58), dan rohaniwan (Pasal 63). Dengan menahan Xanana Gusmão dalam kondisi *incommunicado* untuk jangka waktu panjang, pejabat Indonesia yang berwenang telah melanggar berbagai jaminan fundamental tersebut.

313. Dalam suatu pernyataan yang direkam dalam kaset video di Jakarta dan disiarkan secara luas, Xanana Gusmão menyatakan telah meninggalkan perjuangan Timor-Leste untuk kemerdekaan dan mendorong orang-orang Timor-Leste yang lain untuk melakukan hal yang sama.²¹⁰ Rekaman itu dibuat lima hari setelah penangkapannya. Dalam pernyataan pembelaan yang ia persiapkan, Xanana Gusmão menyatakan bahwa ia telah dipaksa membuat pernyataan dalam rekaman video kaset tersebut:

[D]i Jakarta saya menyatakan, sesuai dengan instruksi-instruksi yang spesifik dari Abilio Osorio, gubernur boneka Timor Timur, bahwa saya siap untuk menyerah.²¹¹

314. Xanana Gusmão menjelaskan alasan-alasannya membuat pernyataan tersebut:

Saya lupa banyak, apa yang sudah saya katakan. Saya ini [pejuang] gerilya. Dan gerilyawan menginginkan – ia menolak mengakhiri perang. Mereka mau saya membuat stemen yang banyak. Itu saya saja. Kalau saya mati, itu saya saja. Dengan itu semua, maka saya mau hilang kesadaran, sampai saya tidak bisa [meneruskan]. Dengan itu semua saya mengakui, dan ini membikin mereka senang...Tapi saya katakan kepada mereka, sesudah setengah jam, “saya tidak terima ini”...dan karena ini saya katakan dalam pembelaan saya, “Jenderal, kita mengucapkan beberapa kata, dari mulut kita saja, dan mereka percaya itu. Di mana kemampuan mereka beranalisa?”²¹²

315. Dalam pernyataan pembelaannya, Xanana Gusmão memulai dengan berkata bahwa pernyataan rekaman video itu diperoleh dengan (penggunaan) paksaan:

Pada kesempatan ini, pertama saya ingin mengemukakan pendapat saya dengan sebebas-bebasnya—yaitu, tanpa segala paksaan...saya

selalu menegaskan bahwa situasi waktu pernyataan-pernyataan saya sebelumnya dibuat di Jakarta seperti itu sehingga tidak dapat dianggap benar.²¹³

316. Xanana Gusmão juga dipaksa membuat sebuah pernyataan untuk pemerintah Portugal:

Saya bilang Portugal tidak usah pikir banyak, Indonesia punya banyak militer yang mengelilingi Pulau Timor, kalau kalian [Portugal] mau datang harus membawa peralatan lengkap seperti Indonesia punya.²¹⁴

317. Pada sidang ke-50 Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB, pemerintah Portugal menunjuk pada pernyataan-pernyataan tersebut, menyatakan bahwa Xanana Gusmão:

[D]iperlihatkan beberapa kali dalam ‘bincang-bincang’ dan ‘wawancara’ di televisi, yang diawasi dan disensor dengan cermat, di mana ia mengingkari pendiriannya selama ini dan menyatakan ‘tobat’, menyerukan kepada rekan-rekannya di Timor-Leste untuk menyerah.”²¹⁵

318. Berbagai pernyataan ini tampaknya merupakan bagian dari strategi Indonesia, untuk menggunakan penangkapan Xanana Gusmão sebagai alat demoralisasi para pendukungnya di Timor-Leste, dan untuk menunjukkan kepada Pemerintah Portugis bahwa Timor-Leste sekarang kokoh berada dalam kekuasaan Indonesia. Dalam hal ini berbagai pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan dasar pengadilannya. Pengadilan ini lebih daripada sekadar pengadilan terhadap pemimpin pemberontakan “separatis”; tapi juga dimaksud sebagai upaya yang secara cermat dirancang untuk memperkuat klaim Indonesia bahwa ia telah menguasai penuh wilayah tersebut; dan dengan kelumpuhan pemimpinnya, kekuatan prokemerdekaan harus menerima kenyataan bahwa meneruskan perlawanan adalah sia-sia.

319. Menjelang dimulainya persidangan, Xanana Gusmão dikembalikan ke Dili di mana ia menjadi sasaran bentuk-bentuk intimidasi yang baru:

Pada malam karena saya melihat dari sikap mereka, sehingga mengerti bahwa mereka mengancam, sehingga saya meminta memanggil orang yang mengancam; mereka ada yang bisa berbahasa Tetum...dan saya sampaikan kepada mereka, bahwa jika kalian ingin membunuh saya, silakan...Saya berteriak dengan emosi... “karena kalian sudah membunuh banyak orang”. Setelah itu saya tidur dan tidak ada orang yang mengganggu lagi saya.²¹⁶

320. Selama masa penahanan *incommunicado* Xanana Gusmão dan pengadilannya, ia tidak mengalami penganiayaan selain isolasi, larangan tidur, dan tekanan psikologis. Dalam pernyataan pembelaannya, Xanana Gusmão menyatakan bahwa perlakuan yang relatif lunak ini memiliki tujuan yang jahat:

Saya telah menerima segala macam perlakuan yang memanjakan, dengan tujuan menjadikan saya seorang Indonesia yang patuh; dan oleh karenanya saya harus terlihat sama seperti para saksi yang dihadapkan ke persidangan ini, seperti itu.²¹⁷

Investigasi

321. Buntut dari penangkapannya, Xanana Gusmão dijadikan sasaran interogasi yang gencar oleh BAIS (Badan Intelijen Strategis; badan intelijen militer Indonesia yang dibentuk pada 1983), BAKIN, dan Kopassus. Di Bali ia diinterogasi oleh Brigadir Jenderal PT4 dan Kepala BAIS ketika itu:

PT4 ada di Bali. Ketua BAIS saya sudah lupa namanya, dia seorang jenderal; setelah itu Hendropriyono pergi ke BAIS. Kemudian mereka menyuruh saya ke BAKIN untuk membuat stemen, kemudian BAKIN menyuruh satu orang Kopassus yang tetap mengikuti saya.²¹⁸

322. Selama interogasi, karena terbatasnya pengetahuan bahasa Indonesia yang dimiliki Xanana Gusmão, disediakan seorang juru bahasa.²¹⁹ Tampak bahwa interogasi terhadapnya tidak hanya dimaksud untuk mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan dasar tuntutan, tapi juga mempunyai tujuan lebih luas yaitu mendapatkan informasi mengenai kekuatan, pengerahan, dan rencana pasukan Falintil.²²⁰ Pendekatan yang tidak terfokus ini memperkuat kesan bahwa pada tahap penahanannya ini, Xanana Gusmão tidak diperlakukan sebagai seorang sipil.

323. Tema pokok di sepanjang proses interogasi ialah upaya membuat Xanana Gusmão mengakui tanggungjawabnya terhadap aksi-aksi gerilyawan Falintil:

Terpenting adalah saya mengakui, karena semua tanggung jawab saya, di mana melawan Indonesia, anggota saya membunuh mereka; semua itu adalah tanggung jawab saya, karena saya yang komandan tertinggi; dengan pengakuan saya, mereka merasa senang, kemudian mereka pindahkan saya ke Mabes [Polri].²²¹

324. Usaha untuk mengorek pengakuan dari Xanana Gusmão ini dapat merupakan sebuah pelanggaran atas haknya untuk tidak dibebani kewajiban memberikan bukti menurut Pasal 66 KUHAP.

325. Sepanjang interogasi atas dirinya, Xanana Gusmão tidak ditawarkan atau disediakan penasihat hukum seperti yang disyaratkan dalam Pasal 54 KUHAP. Menurut *Asia Watch*, seorang perwira BAIS mengatakan bahwa Xanana Gusmão diinterogasi tanpa didampingi oleh seorang pengacara karena ia seorang tawanan perang.²²² Ini sebagian didukung oleh fakta bahwa ia diinterogasi mengenai topik-topik militer.*

* Harus dicatat bahwa interogasi yang dilakukan oleh militer dan intelijen sering terjadi sepanjang proses peradilan selama masa pendudukan Indonesia.

Tetapi sejak Xanana Gusmão dipindahkan ke Mabes Polri di Jakarta dan diizinkan berhubungan dengan dunia luar, para pejabat yang berwenang di Indonesia tampak lebih memperlakukan Xanana Gusmão sebagai orang sipil menurut hukum pidana daripada sebagai orang militer. Akhirnya, Xanana Gusmão dibawa ke depan pengadilan sipil dan dihadapkan pada dakwaan-dakwaan sipil.

Akses terhadap pengacara

326. Seperti dinyatakan di atas, selama 17 hari setelah penangkapannya Xanana Gusmão tidak diizinkan berhubungan dengan dunia luar, termasuk dengan pengacara. Baru pada pertengahan Januari, sekitar dua bulan setelah penangkapannya, Xanana Gusmão mendapat pendampingan hukum. Walau demikian, Xanana Gusmão tetap tidak diizinkan menunjuk penasihat hukumnya secara bebas, melainkan disediakan seorang pengacara yang memiliki hubungan erat dengan militer dan lembaga-lembaga intelijen Indonesia. Sebelum penunjukan pengacara ini, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berusaha mendampingi Xanana Gusmão. Istri dan orangtua Xanana Gusmão telah memberi surat kuasa dan meminta YLBHI bertindak sebagai pengacaranya.²²³ Namun, sejak saat itu pihak berwenang Indonesia berulang kali mencoba menghalangi upaya Xanana Gusmão berkomunikasi dengan YLBHI. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran hak Xanana Gusmão menurut hukum Indonesia untuk menunjuk pengacara yang independen.

327. Ketika ditahan di markas besar kepolisian di Jakarta, Xanana Gusmão menerima sepucuk surat dari YLBHI yang menawarkan untuk menyanggupi permintaan keluarganya agar ia dibela oleh para pengacara YLBHI.²²⁴ Sekitar masa itu pulalah para pengacara lembaga bantuan hukum tersebut juga mengirim sepucuk surat kepada panglima angkatan bersenjata Indonesia, Jenderal Try Sutrisno, yang memintanya mengizinkan Xanana Gusmão menunjuk penasihat yang dipilihnya sendiri sesuai dengan KUHAP.²²⁵ Dengan terang-terangan melanggar ketentuan KUHAP, pada 17 Desember Kasubdit (Kepala Sub Direktorat) Reserse Polri, Kolonel Polisi Ahwil Lutan, menolak permintaan para pengacara YLBHI untuk bertemu dengan calon klien mereka.²²⁶ Alasannya bahwa para pengacara lembaga bantuan hukum tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen yang menunjukkan bahwa keluarga Xanana Gusmão telah meminta mereka untuk membelanya.²²⁷

328. Meskipun ditolak bertemu langsung dengan Xanana Gusmão, YLBHI tetap mengirimkan surat kepadanya, menawarkan untuk membelanya. Dalam pernyataan pembelaannya, Xanana Gusmão menjelaskan apa yang terjadi:

Pada tanggal 22 Desember saya menerima surat yang dikirim untuk saya dari LBH. Pada tanggal 23 Desember saya membalas kepada mereka, menerima seorang pengacara. Tapi saya dipaksa untuk mencabut penerimaan saya, kemudian pada 30 Desember saya harus menulis sepucuk surat untuk LBH, menolak tawaran mereka. Surat pertama saya, yang sudah dicegat, dikembalikan kepada saya.²²⁸

329. Satu-satunya penjelasan yang diberikan dalam surat Xanana Gusmão mengenai penolakan bantuan dari para pengacara YLBHI ialah bahwa ia tidak memerlukan jasa mereka.²²⁹ Pejabat Indonesia yang diwawancarai oleh *Asia Watch* menyatakan bahwa Xanana Gusmão sendirilah yang memutuskan bahwa ia tidak menginginkan bantuan dari para pengacara lembaga bantuan hukum tersebut. Mereka menyatakan, dengan mengikuti permintaan Xanana Gusmão dalam hal ini, mereka telah menegakkan hak-hak Xanana Gusmão.²³⁰ Xanana Gusmão menyangkal hal ini, dan sebaliknya menyatakan bahwa ia telah dipaksa menolak para pengacara lembaga bantuan hukum tersebut:

[Pihak penguasa Indonesia] berusaha untuk meyakinkan saya tentang pilihan [pengacara] saya dan menggunakan banyak alasan untuk ini.²³¹

330. Xanana Gusmão juga diberitahu bahwa “LBH tidak bisa dipercaya siapapun”.²³² Kritik ini muncul dari cara YLBHI membela para terdakwa dalam sidang-sidang pengadilan kasus demonstrasi di Jakarta pada 19 November 1991, setelah Pembantaian Santa Cruz. (Lihat di atas, bagian tentang Pengadilan di Jakarta, paragraf 241 – 301.) Ketika itu, di bawah tekanan pihak berwenang Indonesia, Xanana Gusmão menolak tawaran pengacara lembaga bantuan hukum tersebut: “Saya bisa berbuat apa?”²³³

331. Setelah Xanana Gusmão dipaksa menolak bantuan YLBHI di akhir Desember 1993, pihak berwenang Indonesia berusaha mengangkat Sudjono, seorang pengacara Indonesia, sebagai penasihat hukumnya. Dalam sepucuk surat kepada Mahkamah Hakim Internasional (ICJ), Xanana Gusmão menjelaskan apa yang terjadi:

Pada paruh kedua Januari, (ketika saya) sudah ditahan di Kejaksaan, (Mayor) Jenderal Hendro datang menjenguk saya, didampingi oleh Sudjono. Saya tidak punya pilihan kecuali menandatangani deklarasi yang mengakuinya sebagai penasihat hukum saya.²³⁴

332. Berdasarkan itu, Sudjono secara resmi ditunjuk sebagai pengacara Xanana Gusmão pada 26 Januari 1993.²³⁵ Xanana Gusmão membicarakan situasinya:

Jadi mereka cari jalan untuk komunikasi dengan saya agar cabut dari LBH, setelah itu mereka mengirim pengacara dari polisi, pengacara dari militer. LBH juga mengirim surat, dari militer juga mengirim surat, untuk menunjukkan bahwa mereka bisa membela saya. Untung mereka [militer] sedikit bodoh, kiriman datang terlambat. Saya melihat semua itu dan mereka memanggil saya. Saya bilang, “menurut etika, kalau saya tidak mengenal, ya, tidak mengenal kalian semua, jika tidak mau ya, tidak mau kalian semua.” Yang lain berbicara, “saya bisa membela.” Dengan ini, kami tarik sana tarik sini, baru Hendro Priyono menyuruh Sujono, saya sudah tidak mau. Seperti mau buat berita acara, dengan semua itu, mereka bilang jika

*tidak ada pengacara tidak usah datang. Tapi tujuan saya adalah ke pengadilan, untuk itu saya mau naik pesawat, tarik sini tarik sana, maka saya setuju Sudjono sebagai pengacara.*²³⁶

333. Pada waktu itu tampaknya Xanana Gusmão memasrahkan dirinya untuk dibela oleh Sudjono demi memastikan kasusnya dibawa ke pengadilan. Akan tetapi jelas bahwa Xanana Gusmão tidak senang dengan hal ini. Sebelum mereka berdua berangkat ke Dili untuk persiapan sidang, Xanana Gusmão berkata kepada Sudjono: “Saya tidak mau Anda, tapi tidak apa-apa, saya tanda tangan.”²³⁷

334. Sejak awal sudah jelas bahwa Sudjono bukanlah seorang pengacara independen. Mayor Jenderal Hendropriyono dari BAIS hadir pada saat Xanana Gusmão menandatangani surat penunjukan Sudjono sebagai penasihat hukumnya. Sudjono teman dekat Kolonel Ahwil, Kasubdit Reserse Polri,²³⁸ dan sudah umum diketahui oleh kalangan hukum Indonesia bahwa ia dekat dengan polisi dan para jaksa penuntut umum.²³⁹ Para anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) dikabarkan telah menyatakan keprihatinan mereka tentang etika dalam pemilihan Sudjono. Laporan *Asia Watch* tentang persidangan Xanana Gusmão merangkum suatu wawancara dengan Sudjono dengan majalah *Jakarta Jakarta*, di mana pengacara tersebut menjelaskan bagaimana ia sampai terlibat dalam kasus tersebut:

Kolonel Ahwil pernah jadi murid Sudjono di Universitas Pancasila di Jakarta dan mereka teman dekat. Waktu Sudjono melihat Kolonel Ahwil di televisi menyertai ICRC untuk menjenguk Xanana Gusmão, dia meneleponnya, dan Kolonel Ahwil mengatakan: “Bagaimana menurut bapak kalau bapak yang menangani kasus Xanana Gusmão?” Sudjono bilang susah, tapi Ahwil terus mendorongnya. Sudjono bimbang, tapi ia kemudian bertemu jaksa yang juga mendorongnya untuk menangani kasus ini, dan kemudian Kolonel Ahwil meneleponnya lagi. Akhirnya ia setuju. (Ini mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan Xanana Gusmão.) Ketika pewawancara menanyakan: “Anda dikenal sebagai pengacara yang dekat dengan polisi dan pejabat,” Sudjono menjawab: “Apa salahnya? Kenapa mereka harus menjadi musuh? Ya begitulah saya dapat hidup.” Sudjono belakangan mengatakan, bahwa majalah tersebut akurat secara faktual, tapi ia tidak senang bagaimana ia ditampilkan.²⁴⁰

335. Hukum dan perundang-undangan Indonesia menyatakan bahwa tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP), hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP), dan hak untuk menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 KUHAP). Dengan turut campur untuk memastikan bahwa Xanana Gusmão tidak bisa mendapat pengacara yang dipilihnya sendiri, dan dengan menyodorkan seorang pengacara yang sudah dikenal dekat dengan militer, pihak berwenang Indonesia jelas telah melanggar aturan-aturan yang tertera dalam KUHAP. Aspek ini membedakan persidangan

Xanana Gusmão dengan persidangan lainnya, seperti persidangan Santa Cruz di Dili dan Jakarta, di mana para pengacara lembaga bantuan hukum pada akhirnya dapat membela para tahanan politik orang Timor-Leste. Keteguhan para pejabat yang berwenang di Indonesia untuk menggunakan seorang pengacara yang bersimpati dengan kepentingan mereka, hanyalah salah satu dari sejumlah indikasi niat para pejabat berwenang Indonesia untuk mengatur pengadilan Xanana Gusmão dalam tingkat yang bahkan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan sebelumnya. Tampaknya pihak berwenang Indonesia menyadari bahwa persidangan Xanana Gusmão akan menjadi sorotan dunia. Oleh karena itu, pihak berwenang Indonesia merasa perlu memastikan agar Xanana Gusmão memiliki seorang pengacara yang ditunjuk oleh negara dan bukan pengacara yang dipilihnya sendiri.

Persidangan

Surat dakwaan

336. Surat dakwaan Xanana Gusmão dibuat pada 25 Januari 1993. Ia dikenai dakwaan makar, menurut Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menariknya, dakwaan ini dibuat bersamaan dengan dakwaan permufakatan untuk melakukan makar menurut Pasal 110 KUHP. Kemungkinan besar jaksa penuntut umum merasa bahwa dakwaan ini perlu karena Xanana Gusmão tidak hadir pada sebagian besar peristiwa yang menjadi dasar segala dakwaan terhadapnya. Apapun bentuknya, baik makar maupun permufakatan untuk melakukan makar, bisa dikenai hukuman maksimum penjara seumur hidup. Xanana Gusmão juga dikenai dakwaan memiliki dan menyimpan secara ilegal dua pucuk senjata api.²⁴¹ Untuk dakwaan ini hukuman maksimumnya ialah hukuman mati, menurut Undang-Undang No 12/1951.

337. Patut diperhatikan bahwa jaksa penuntut umum tidak mendakwa Xanana Gusmão dengan subversi. Undang-undang Subversi pernah digunakan dalam pengadilan-pengadilan politik sebelumnya [Baca persidangan-persidangan Gregório Saldanha dan Francisco Branco di bagian tentang Santa Cruz, paragraf 115 – 240], dan dapat dikatakan bahwa subversi memiliki dampak politik yang lebih besar daripada permufakatan untuk melakukan makar dan kepemilikan senjata api secara ilegal. Alasan resmi atas keputusan tersebut, yang diberikan kepada pengamat persidangan *Asia Watch*, ialah bahwa subversi hanya bisa didakwakan dalam kasus-kasus di mana diduga terjadi kegiatan bawahtanah. Karena Xanana Gusmão memimpin serangan-serangan militer terbuka, subversi tidak dapat diberlakukan.²⁴² Walau demikian, surat dakwaannya juga menuduh aktivitas klandestin, termasuk pembentukan sebuah jaringan komunikasi bawahtanah.²⁴³ Hal ini tampaknya bertentangan dengan penjelasan resmi mengapa subversi tidak didakwakan. Pemerintah Indonesia mungkin tidak ingin kasus tingkat tinggi semacam ini menarik perhatian terhadap undang-undang anti-subversi yang kontroversial, atau bahwa pemerintah terlihat menanggapi kritikan internasional atas hukum ini.²⁴⁴ Xanana Gusmão sendiri memperkuat dugaan ini. Ia menceritakan kepada Komisi:

Pada awalnya subversif, tetapi kami berbicara. Saya membiarkannya karena saya juga tengah mempersiapkan surat saya...Mereka berdiskusi dengan saya...mereka tidak bisa bilang subversi, karena sebelum mereka masuk, UDT dan Fretilin telah memegang senjata... jadi saya hanya membiarkannya, saya bilang benar. Karena yang saya pedulikan adalah agar dapat berbicara...Karena saya yang membela diri. Saya membiarkan saja, segalanya telah dipersiapkan agar saya bisa menang. Jadi mereka menyampaikan tuduhan lain, tapi hanya menuduh kepemilikan senjata secara ilegal. Mereka telah menarik kembali tuduhan subversif.²⁴⁵

338. Ketika surat dakwaan pada akhirnya tidak memasukkan dakwaan subversi, posisi Indonesia tampaknya telah berubah.

339. Surat dakwaan berisi sejumlah tuduhan faktual yang terkait dengan berbagai kegiatan militer dan organisasi Xanana Gusmão. Tuduhan tersebut mulai sejak 17 Juli 1976, yaitu hari disahkannya aneksasi Timor-Leste oleh DPR.²⁴⁶ Surat dakwaan tersebut menuduh bahwa Xanana Gusmão diangkat sebagai panglima Falintil pada Konferensi Nasional Fretilin tanggal 3 Maret 1981 di Viqueque (Konferensi Reorganisasi Nasional), dan bertanggung jawab atas sekitar 25 serangan yang dilakukan terhadap tentara Indonesia dan orang-orang sipil antara 1981 dan tanggal penangkapannya.²⁴⁷ Termasuk dalam serangan-serangan ini ialah penyergapan-penyergapan yang dilakukan oleh Falintil dan pembantaian Kraras. Xanana Gusmão dituduh terlibat langsung hanya dalam satu penyerangan—yakni penyergapan terhadap tentara Indonesia di Sungai Laçlo antara Alas dan Fatuberliu di Manufahi pada Desember 1988.²⁴⁸ Peranannya dalam berbagai serangan lain tidak dijelaskan, tapi ada tanggung jawab secara tidak langsung karena kedudukannya sebagai panglima tertinggi Falintil. Berbagai aktivitas organisasinya dianggap mencakup pembentukan Dewan Nasional Perlawanan Maubere (Concelho Nacional da Resistência Maubere, CNRM) pada 31 Desember 1988, dengan Komite Pengarah sebagai front politik, Falintil sebagai front militer, dan Komite Eksekutif sebagai front klandestin.²⁴⁹ Xanana Gusmão juga dituduh membangun jaringan klandestin di bawah CNRM, Perlawanan Nasional Pelajar dan Mahasiswa Timor-Leste (Resistencia Nacional dos Estudantes de Timor-Leste, Renetil) dan Organisasi Pemuda Katolik Timor-Leste (Organização da Juventude Católica de Timor-Leste, Ojectil).²⁵⁰ Salah satu tuduhan spesifik adalah bahwa Xanana Gusmão telah memerintahkan Constancio Pinto untuk mengorganisasi demonstrasi Santa Cruz pada 12 November 1991.²⁵¹

Kondisi ruang sidang

340. Persidangan dimulai pada 1 Februari 1993. Meskipun sidang tersebut dihadiri oleh para pengamat dari *Asia Watch*, Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ), komunitas diplomatik, dan wartawan lokal dan internasional, persidangan itu tidak bebas terbuka untuk umum.²⁵² Amnesty International tidak diizinkan mengirim seorang pengamat, dan karena pemberian visa pada pengamat dari *Asia Watch* ditunda, ia hanya dapat

menghadiri satu sesi persidangan. Selama di Dili, pengamat dari *Asia Watch* ada di bawah pengawasan intelijen militer dan selalu didampingi oleh seorang wakil dari Departemen Luar Negeri Indonesia. Para wartawan diberi peringatan untuk tidak memberitakan kejadian ketika seorang saksi meneriakkan slogan-slogan prokemerdekaan di dalam ruang sidang (lihat paragraf 350 di bawah).²⁵³

341. Pembatasan terhadap khalayak ramai bahkan lebih ketat lagi. Semua orang yang menghadiri persidangan harus sudah memperoleh persetujuan lebih dahulu, nama mereka dicocokkan dengan daftar dan melewati dua tahap pemeriksaan sebelum mereka dapat memasuki ruangan.²⁵⁴ Anggota keluarga Xanana Gusmão tidak diizinkan hadir dan ruang sidang kebanyakan berisi agen-agen intelijen Indonesia.²⁵⁵ Xanana Gusmão menggambarkan kesannya mengenai ruang sidangnya:

Dalam ruangan-ruangan gedung yang mereka sebut pengadilan ini, saya hanya melihat orang Indonesia, dan terutama anggota militer Indonesia dari Kopassus dan BAIS... Dalam hukum Indonesia, pengadilan semacam ini seharusnya terbuka. Tapi, ketika saya masuk ke ruangan, anggota publik yang saya lihat hanyalah pejabat militer, beberapa di antaranya yang merancang pengadilan ini.²⁵⁶

342. Menurut seorang pengamat, sopir taksinya sangat takut oleh suasana di sekitar gedung pengadilan dan menolak untuk membawa kendaraannya ke dekat gedung tersebut.²⁵⁷

343. Perlu diperhatikan bahwa sistem pengeras suara dipasang di luar ruang sidang agar masyarakat dapat mendengar jalannya persidangan.²⁵⁸ Namun, menurut laporan, pengeras suara tersebut dimatikan pada hari persidangan yang paling kontroversial, ketika Xanana Gusmão akan membacakan pernyataan pembelaannya.²⁵⁹ Peristiwa ini hanya merupakan satu contoh bagaimana akses umum terhadap jalannya persidangan diperketat ketika sidang dianggap dapat merugikan kepentingan Indonesia. Menurut sebuah *aide-memoire* yang disampaikan oleh Pemerintah Portugal kepada Sekretaris Jenderal PBB:

Menarik untuk diperhatikan bagaimana akses [ke ruang persidangan] difasilitasi di awal persidangan, dan bagaimana is dihalang-halangi di tahap akhir ketika Xanana Gusmão memberi pertanda yang jelas bahwa ia akan mengutuk manipulasi politik seluruh persidangan, dan menarik pernyataan penyesalan awalnya yang menurutnya dipaksa untuk dibuat.²⁶⁰

344. Kenyataan bahwa pada menjelang akhir sidang, wakil PBB, Tamrat Samuel, dicegah menghadiri dua sesi persidangan, dan para diplomat asing tidak diperbolehkan mendengarkan jalannya sidang, memperkuat kesimpulan Pemerintah Portugal di atas.²⁶¹ Terlihat bahwa persidangan direkayasa sedemikian rupa, di mana pengamat hanya diizinkan hadir pada tahap sidang yang akan menguntungkan citra pemerintah Indonesia dan dicegah ketika ada kemungkinan Indonesia dipermalukan.

345. Pengadilan tersebut jelas-jelas memiliki kekurangan dalam hal keterbukaan sidang. Pasal 64 dan 153 (3) KUHAP mensyaratkan bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum. Jika syarat ini tidak dipenuhi, seperti yang tampaknya terjadi pada persidangan Xanana Gusmão, menurut pasal 153 (4) KUHAP keputusan sidang harus dibatalkan.

Bahasa

346. Tidak seperti para terdakwa dalam pengadilan-pengadilan politik yang lain, Xanana Gusmão tidak begitu mengerti bahasa Indonesia. Oleh karena itu penerjemahan yang baik sangat penting agar ia dapat mengikuti jalannya persidangan. Pada saat persidangan, hadir dua orang juru bahasa yang ditunjuk oleh pengadilan, yang bertugas menerjemahkan antara bahasa Indonesia, Portugis, dan Tetum.²⁶² Jalannya sidang tidak seluruhnya diterjemahkan dan terjemahannya tidak selalu akurat.²⁶³ Dalam satu sesi, pengamat sidang dari *Asia Watch* mencatat bahwa kesaksian dari seorang saksi samasekali tidak diterjemahkan.²⁶⁴ Umumnya yang diterjemahkan adalah komunikasi antara para hakim dan Xanana Gusmão, sementara proses sidang yang lain tidak diterjemahkan.²⁶⁵ Ketidaklayakan penerjemahan ini diperkuat oleh cerita Xanana Gusmão: “Mendengar melalui terjemahan yang terkadang terjadi salah terjemahan.”²⁶⁶

347. Xanana Gusmão memperhatikan bahwa para hakim bukannya memastikan penerjemahannya sesuai atau tidak dengan standar yang layak, atau setidaknya tidaknya menunjuk seorang juru bahasa yang lebih ahli, tapi mereka justru mengolok-olok juru bahasanya:

*Dia bertanya sesuatu tetapi mereka menyindirnya, menyindir ini saya mengerti sedikit karena mereka ketawa, ini saya menyaksikan mereka.*²⁶⁷

348. Hukum Indonesia mengharuskan para hakim menunjuk seorang juru bahasa, jika terdakwa atau saksi tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 177 KUHAP). Walaupun seorang juru bahasa telah ditunjuk, kemampuannya tidak cukup untuk memastikan bahwa Xanana Gusmão dapat sepenuhnya memahami jalannya persidangan.

Para saksi

349. Sebagai gambaran yang jelas tentang sifat persidangan yang tidak berimbang, 20 saksi memberikan kesaksian memberatkan sementara tidak ada satu pun saksi yang memberikan kesaksian meringankan.²⁶⁸ Kemandirian sebagian besar saksi yang memberatkan pun perlu dipertanyakan dengan serius. Empat dari saksi yang dijadwalkan hadir ternyata tercantum dalam daftar tahanan pemerintah Indonesia; sementara para saksi yang lain, diberitakan oleh *Asia Watch* juga para tahanan walaupun nama-nama mereka tidak tercantum dalam daftar tersebut.²⁶⁹ Para saksi yang tidak terdapat dalam daftar itu telah dilanggar hak mereka untuk didampingi pengacara selama interogasi. Hal ini merupakan masalah khusus karena pengadilan

ini sangat mengandalkan BAP para saksi tersebut.²⁷⁰ Dalam persidangan, BAP para saksi dibacakan dan dianggap sama kuatnya dengan kesaksian lisan di depan pengadilan. Dengan mengandalkan BAP yang didapat dari interogasi yang tidak dihadiri pengacara, timbul masalah bahwa pengadilan menerima kesaksian yang bisa saja diperoleh melalui intimidasi atau tidak mencerminkan apa yang sebenarnya dikatakan oleh para saksi selama interogasi. Hal ini semakin diperkuat oleh hadirnya seorang saksi yang tidak memahami bahasa Indonesia dalam sidang ini. Mariano da Silva dimintai kesaksiannya mengenai BAP yang ia tandatangani. Selain buta huruf, kemampuannya berbahasa Indonesia tidak cukup untuk memahami isi dari pernyataan dalam BAP tersebut, meskipun ia telah menandatangani.²⁷¹ Kenyataan bahwa sejumlah saksi yang memberatkan berstatus tahanan, menjalani interogasi tanpa kehadiran pengacara, dan tidak memahami isi BAP mereka, menimbulkan keraguan bahwa para saksi yang memberatkan merasa bebas memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya selama interogasi dan pada saat sidang. Menurut Xanana Gusmão: Ada saksi tetapi semuanya rekayasa, saksi hanya untuk membantu proses.²⁷²

350. Saksi yang memberatkan, Saturnino da Costa Belo, dapat menggambarkan hal ini. Saturnino seorang terpidana makar atas keterlibatannya dalam demonstrasi Santa Cruz, dan pada saat pengadilan atas Xanana Gusmão sedang menjalani sembilan tahun masa hukumannya. Ia dipanggil sebagai saksi pada 4 Maret 1993. Ketika ia memasuki ruang sidang, ia meneriakkan:

*Viva independencia! Viva Timor-Leste! Viva Xanana Gusmão!...
Saya minta pemerintah Indonesia menghormati hak asasi manusia
di Timor Timur.*²⁷³

351. Ia kemudian segera dikeluarkan dari ruang sidang, acara mendengar kesaksian ditangguhkan, dan seorang dokter dipanggil untuk memeriksanya. Empat puluh lima menit kemudian dokter tersebut memberitahu sidang bahwa saksi tersebut mengidap “gangguan mental” dan tidak layak (secara fisik dan mental) untuk memberikan kesaksian.²⁷⁴ Buntut dari kejadian ini BAP Saturnino dibacakan di hadapan pengadilan.* Setelah teriakannya yang tiba-tiba itu Saturnino dikatakan diperingatkan oleh militer, “kalau coba-coba melakukan hal seperti itu lagi, ia akan ditembak di tempat.”²⁷⁵ Kemudian, setelah kejadian itu, akses kepada Saturnino dan para tahanan Santa Cruz lainnya diperketat.²⁷⁶

352. Dalam sebuah pernyataan kepada Komite Dekolonisasi, Amnesty International menyebut tentang sepucuk surat yang ditulis oleh sumber yang dirahasiakan dari Penjara Becora tentang perlakuan yang diterima oleh Saturnino:

.....
* *Suara Timor Timur* memberitakan peristiwa itu, “walaupun Saturnino tidak bisa hadir, dengan izin (Pengadilan) pernyataannya dari waktu interogasi dibacakan.” Lihat International Commission of Jurists, “Report on the Trial of Jose Alexandre Gusmão, diterbitkan dalam ETRA, “A Travesty of Justice: East Timor’s Defence”, Mei 1996, hal. 43.

Informasi terbaru memperkuat dugaan bahwa ia telah diancam dan dianiaya sehubungan dengan pernyataannya. Menurut surat dari penjara yang dikutip di atas:

“Karena tuntutan yang dia buat kepada Pemerintah Indonesia pada saat sidang untuk menghormati hak asasi manusia di Timor Timur, dia dipukuli dan diinterogasi dengan gencar oleh polisi militer. Mereka mengancamnya dengan menodongkan pistol ke kupingnya dan dia dimasukkan ke dalam sel, dan dibiarkan di sana dalam kegelapan total... Karena dia terus menolak meminta maaf kepada hakim, dan tidak mengakui berbuat kesalahan apapun, dia tidak lagi dibawa ke hadapan pengadilan sebagai saksi dengan alasan sakit, padahal faktanya dia samasekali tidak sakit.”²⁷⁷

353. Dalam pernyataan pembelaannya, Xanana Gusmão menyebut kejadian itu:

Saksi Saturnino da Costa Belo adalah contoh yang sangat jelas tentang keberanian bangsa ini. Dokumen medis tipuan yang mengatakan bahwa Saturnino sakit seharusnya membuat saudara-saudara sekalian malu, karena Anda semua tahu kasus ini tergantung pada Anda.²⁷⁸

354. Meskipun perilaku Saturnino tidak terkendali, hal itu seharusnya tidak cukup untuk mencegahnya memberi kesaksian, dan tentunya dapat dilakukan upaya untuk menenangkannya serta memberinya kesempatan untuk menyampaikan kesaksiannya. Terlebih lagi kesaksiannya perlu demi kepentingan jalannya pengadilan karena Saturnino ialah saksi yang dapat menjelaskan mengenai keterlibatan Xanana Gusmão dalam perencanaan demonstrasi Santa Cruz.

355. Seperti telah disebut di atas, tidak seorang pun saksi meringankan dihadirkan. Meski tidak diketahui apakah pengacara Xanana Gusmão, Sudjono, telah melakukan upaya untuk menemukan saksi yang meringankan, sangat mungkin alasan tidak ada saksi yang hadir karena mereka terlalu takut untuk memberi kesaksian. Suasana takut karena berbagai tindakan pihak berwenang sebelum dan sepanjang persidangan, dari perlakuan terhadap Xanana Gusmão, keluarga serta para rekannya, masa setelah penangkapan hingga jalannya persidangan yang dikontrol secara ketat, semuanya sudah cukup untuk mencegah kehadiran para calon saksi meringankan. Selain itu berbagai langkah khusus diambil untuk memastikan bahwa tidak seorang pun saksi meringankan hadir. Gubernur Timor Timur Abilio José Osorio Soares mengatakan bahwa ia sendiri tidak akan hadir sebagai saksi yang meringankan, dan mengumumkan larangan bagi semua pegawai negeri untuk memberikan kesaksian untuk pembelaan.²⁷⁹

356. Pasal 65 KUHAP menjamin hak terdakwa untuk mencari dan mengajukan saksi. Meski dapat dikatakan hak ini tidak terlanggar, karena mungkin saja tidak ada saksi yang mau memberikan kesaksian, kegagalan para pejabat berwenang Indonesia untuk menjamin keselamatan mereka yang akan bersaksi, larangan bagi pegawai negeri

untuk memberi kesaksian, dan suasana ketika persidangan berlangsung, semuanya turut membuahkan hasil yang seperti ini. Tanpa kehadiran saksi yang meringankan, pengacara Xanana Gusmão tidak dapat mengangkat isu-isu fundamental seperti keabsahan pendudukan Indonesia atas Timor-Leste dan apakah pengadilan memiliki yurisdiksi dalam hal ini. Pengadilan tersebut tampak memihak dan tidak peduli menemukan kebenaran dari apa yang sesungguhnya terjadi.

Kinerja kuasa hukum

357. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, terdapat keraguan mengenai profesionalisme dan kemandirian Sudjono, sejak saat ia ditunjuk sebagai pengacara Xanana Gusmão. Berbagai kekhawatiran ini tidak menjadi berkurang jika melihat kinerjanya selama persidangan. Laporan *Asia Watch* memerinci sejumlah kejadian di mana Sudjono gagal menjalankan kewajibannya dalam pembelaannya atas Xanana Gusmão. Pertama, ia tidak pernah menyelidiki kondisi penangkapan, penahanan, dan interogasi terhadap Xanana Gusmão, meskipun ada indikasi kuat telah terjadi pelanggaran.²⁸⁰ Kedua, enam minggu setelah dimulainya persidangan, Sudjono mengatakan bahwa ia belum mendiskusikan strateginya dengan Xanana Gusmão.²⁸¹ Ketiga, Sudjono mengatakan bahwa tidak adanya bahasa bersama untuk berkomunikasi dengan kliennya bukanlah masalah karena kemampuan Xanana Gusmão memahami bahasa Indonesia membaik.²⁸² Ini terjadi walaupun Xanana Gusmão terus meminta disediakan juru bahasa sepanjang proses peradilan. Akhirnya, seperti yang akan dijelaskan dengan lebih terperinci berikut ini, sepertinya Sudjono telah membuat pernyataan palsu tentang permohonan pengampunan.

358. Dalam pernyataan pembelaannya, Xanana Gusmão memberikan sebuah contoh tentang pandangan politik Sudjono: “Sudjono menyatakan bahwa Timor-Leste selalu menerima bahwa ia adalah bagian wilayah Indonesia.”²⁸³ Pernyataan seperti ini memperkuat keraguan bahwa Sudjono seorang pengacara yang tidak berpihak dan independen. Selanjutnya, dalam suratnya kepada Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ), Xanana Gusmão menceritakan hubungan antara Sudjono dan para pejabat intelijen militer:

Selama seluruh proses, kerjasama antara Sudjono dan BAIS sangat mencolok. Ia bilang pada saya bahwa ia wajib melapor kepada pihak berwenang mengenai setiap sesi secara terperinci.²⁸⁴

359. Sebuah contoh yang menggambarkan kurangnya profesionalisme dan kemandirian Sudjono terlihat pada eksepsi pembelaan yang dikemukakannya. Menurut pengamat dari *Asia Watch*, para hakim memberi waktu seminggu kepada Sudjono untuk menyiapkan eksepsinya. Sudjono lalu mengatakan, bahwa ia hanya perlu lima hari; kemudian kedua belah pihak sepakat dengan tiga hari.²⁸⁵ Ini merupakan waktu yang luarbiasa singkat, khususnya mengingat bahwa Sudjono baru secara resmi diakui sebagai pengacara Xanana Gusmão enam hari sebelum persidangan dimulai.²⁸⁶ Lebih lanjut, eksepsi yang ia sampaikan tampak disiapkan dengan tergesa-gesa, dan panjangnya relatif singkat, hanya sembilan halaman.²⁸⁷

360. Eksepsinya tidak mengangkat isu pelanggaran terhadap KUHAP yang telah terjadi pada saat penangkapan dan penahanan Xanana Gusmão, dan tidak pula membuat argumen-argumen hukum yang kuat.²⁸⁸ Tidak ada argumen yang didasarkan pada status Timor-Leste menurut hukum internasional. Sudjono justru berargumentasi bahwa karena Fretilin adalah kelompok prokemerdekaan yang tidak mengakui kekuasaan Indonesia atau sistem hukumnya, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili terdakwa.²⁸⁹ Ketidaksahan pendudukan Indonesia menurut hukum internasional tampak tidak dikemukakan. Ketika eksepsi tersebut ditolak, Sudjono mengatakan akan naik banding terhadap putusan tersebut dan menyatakan kepada pers:

Saya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atas putusan Hakim karena integrasi tidak sah secara hukum dan masih menjadi masalah di PBB.²⁹⁰

361. Namun demikian, sejauh yang diketahui Komisi, tidak pernah ada permohonan banding yang diajukan. Sudjono tidak membuat pernyataan ini di pengadilan, tapi kepada media. Ini menunjukkan bahwa sepertinya Sudjono bermaksud membuat para wartawan terkesan, dengan menunjukkan diri sebagai seorang pengacara yang beretika dan profesional, tapi tidak siap menindaklanjuti perkataannya tersebut dalam ruang pengadilan dengan bertindak untuk kepentingan dan hasil terbaik yang bisa diperoleh kliennya.

362. Perlu dicatat bahwa tidak semua laporan mengenai Sudjono negatif. Ia dipuji atas kesediaannya untuk mengerjakan kasus ini *pro-bono* dan menanggung pengeluarannya sendiri.²⁹¹ Pastilah sangat sulit untuk menemukan saksi meringankan, seperti yang ia akui. Sepanjang persidangan ia berhasil mendiskreditkan sejumlah saksi memberatkan, dengan membuktikan bahwa kesaksian mereka adalah cerita tangan kedua.²⁹² Akhirnya, dalam proses mitigasi atau peringanan, Sudjono menyebutkan kesediaan Xanana Gusmão untuk bekerja sama dan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas berbagai aksi gerilyawan Falintil.²⁹³

363. Walau demikian Xanana Gusmão tidak puas dengan kinerja pengacaranya. Dalam suratnya kepada Komisi Ahli Hukum Internasional Xanana Gusmão menulis:

*Satu-satunya hal yang ia pernah bantu, setelah berkali-kali saya minta, adalah untuk meyakinkan Hakim untuk menghindari konfrontasi dengan saya selama sesi persidangan, ketika saya menjalani pemeriksaan silang.*²⁹⁴

364. Kinerja Sudjono yang tidak baik terlihat amat jelas dari kegagalannya melakukan intervensi ketika Xanana Gusmão digagalkan membacakan pleidoinya. Semula Xanana Gusmão gagal membacakan pleidoinya pada 13 Mei 1993, karena pleidoi tersebut belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.²⁹⁵ Karena keputusan ini, Xanana Gusmão memutuskan untuk mengumumkan bahwa Sudjono tidak lagi menjadi penasihat hukumnya.²⁹⁶ Persidangan pun ditunda agar kedua pihak dapat

membicarakan masalah tersebut, dan Xanana Gusmão mengajukan syarat-syarat bagi Sudjono untuk dapat terus bertindak sebagai pengacaranya. Menurut Xanana Gusmão, karena menghadapi persyaratan ini, Sudjono memberikan jaminan kepada Xanana Gusmão bahwa Xanana Gusmão akan diberi kesempatan untuk membacakan pernyataannya sendiri.²⁹⁷

365. Ketika Xanana Gusmão mulai membaca pleidoi pembelaannya, jaksa mengajukan keberatan setelah Xanana Gusmão baru membaca tiga halaman pleidoinya, dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak relevan dengan dakwaannya.²⁹⁸ Para hakim setuju.²⁹⁹ Meskipun Sudjono sudah memberikan jaminan, dan walaupun hak untuk menyatakan pembelaan tertuang dalam Pasal 182(1)(b) KUHAP, Sudjono tidak melakukan intervensi atas nama Xanana Gusmão. Bahkan sebaliknya, Sudjono mengambil dokumen Xanana Gusmão darinya dan memberikannya kepada hakim.³⁰⁰ Diungkapkan oleh Xanana Gusmão:

*Hakim yang melakukan interupsi, dan setelah itu saya tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Sudjono mengambilnya dan tidak lagi memberikan aku kesempatan.*³⁰¹

366. Dalam suratnya kepada Komisi Ahli Hukum Internasional, Xanana Gusmão menjelaskan kejadian tersebut:

Kita sudah sepakat bahwa dalam sesi akhir saya akan mendapat kesempatan untuk mengungkapkan opini saya mengenai vonis yang akan dijatuhkan hari itu. Karena jaksa dan hakim menggambarkan saya sebagai warga negara Indonesia, saya katakan kepada Sudjono, bahwa ia harus mengajukan keberatan atas ini dan itu, dan akhirnya, saya akan klarifikasi hal ini juga. Saya baru mau mulai bicara ketika Hakim mengatakan bahwa sidang ini sudah selesai, tanpa reaksi apa pun dari Sudjono.³⁰²

367. Relevan atau tidak isi pernyataan Xanana Gusmão, Sudjono setidaknya harus mengajukan keberatan kepada para hakim yang memaksa Xanana Gusmão berhenti membacakan pembelaannya, dan memastikan bahwa hak Xanana Gusmão yang dijamin KUHAP ditegakkan. Memang kemudian Sudjono protes di hadapan para wartawan bahwa keputusan tersebut tidak adil dan bertentangan dengan hukum Indonesia, tetapi tampaknya ia gagal melakukan hal ini ketika di ruangan sidang.³⁰³

368. Merasa marah karena tindakan Sudjono selama sidang, setelah dijatuhi vonis Xanana Gusmão menulis kepada Komisi Ahli Hukum Internasional, pada 1 Desember 1993, dari penjara Cipinang di Jakarta, bahwa ia menginginkan pengacara lain.

Saya memohon kepada ICJ dan semua lembaga internasional yang terkait dengan hukum internasional untuk melancarkan protes, termasuk dengan menggunakan dokumen ini, dan untuk berkampanye demi dibatalkannya proses pengadilan yang sebelumnya. Sebagai orang asing, sebagai warga negara Timor, dalam hati nurani saya,

dan sebagai warga negara Portugal sesuai hukum internasional, saya memohon intervensi penasihat Portugal, untuk mempercepat komunikasi, yang akan dibantu oleh para pengacara dari LBH.³⁰⁴

Pleidoi Xanana Gusmão

369. Meskipun Xanana Gusmão hanya diizinkan membacakan tiga halaman pleidoinya, dokumen tersebut dipublikasikan ke luar negeri, setelah diselundupkan dari penjara dan mendapat publisitas yang luas.³⁰⁵ Dokumen tersebut ditulis tangan oleh Xanana Gusmão dengan pensil dalam bahasa Portugis, dan ditulis dalam kondisi yang sulit:

Pada saat itu mereka tidak membiarkan saya tidur. Mereka selalu membuat saya sibuk, agar saya tidak bisa berpikir, main kartu dari pagi sampai malam. Ketika saya sudah bosan pun mereka memaksa saya tetap main, dan saya mengusulkan agar pada waktu yang akan datang kita bisa melakukan permainan lain seperti basket. Kadang kami main kartu sampai tengah malam, setelah itu saya meminta mereka bahwa sudah saatnya kita tidur. Lalu mereka ada yang tidur di kamar, kemudian ada yang tidur saja di lantai, dan saya memanfaatkan momen ini untuk minum kopi dan menulis. Ketika menjelang pagi saya menyembunyikan tulisan saya, saya menulis dua salinan pleidoi.³⁰⁶

370. Dalam pleidoinya Xanana Gusmão menekankan pada hukum internasional, dengan mengatakan bahwa Timor-Leste berstatus sebagai wilayah tidak berpemerintahan sendiri, dan ketidakabsahan invasi Indonesia yang berarti pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya:

Kasus Timor-Leste adalah tanggung jawab komunitas internasional, persoalan hukum internasional. Ini adalah kasus di mana prinsip-prinsip universal menjadi taruhannya, kasus di mana ketentuan PBB tentang dekolonisasi telah dimanipulasi, kasus di mana Indonesia telah mengumbar sikap tidak hormatnya kepada resolusi PBB, dan oleh karenanya merupakan pelanggaran terang-terangan oleh Indonesia atas prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok dan standar hukum, perdamaian, dan keadilan universal.³⁰⁷

PBB sampai saat ini terus menolak melegitimasi kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste, kedaulatan yang didapat dari penggunaan paksaan dan kekerasan, dan melalui pelanggaran sistematis atas hak-hak yang paling asasi.³⁰⁸

371. Xanana Gusmão juga memberi argumen bahwa proses “integrasi” Timor-Leste ke Indonesia nyata-nyata cacat hukum. Argumennya didasarkan pada pemaparan yang terperinci tentang proses itu sendiri, mulai dari Deklarasi Balibó hingga

petisi Majelis Rakyat kepada pemerintah Indonesia, dan penolakan komunitas internasional untuk mengakui proses integrasi tersebut. Akan tetapi ia juga meminta mereka yang hadir untuk menggunakan akal sehat mereka:

Apakah mungkin bahwa orang-orang yang sudah menderita di hutan, yang menyaksikan rumah dan harta bendanya dihancurkan oleh orang Indonesia, yang menerapkan kebijakan bumi hangus, apakah benar-benar orang-orang ini 'atas kehendaknya sendiri' meminta berintegrasi dengan Indonesia, tanpa referendum?³⁰⁹

Ribuan dan ribuan lagi warga Timor-Leste dibantai oleh pasukan pendudukan di seluruh wilayah. Satu-satunya politik adalah hukum teror, yang dilakukan untuk menakut-nakuti orang Timor agar mengatakan bahwa mereka senang dengan integrasi.³¹⁰

372. Mengikuti dasar pemikiran argumennya, pada akhir pleidoinya Xanana Gusmão memohon kepada pemimpin pengadilan hingga berbagai macam lembaga dan individu, termasuk komunitas internasional, pemerintah Indonesia, Portugal, dan Amerika Serikat, dan semua sahabat Timor-Leste untuk dapat berperan serta dalam menghasilkan resolusi yang adil. Ia juga beberapa kali berusaha menggugah rasa keadilan orang Indonesia, khususnya generasi mudanya:

Saya harap generasi baru Indonesia, atau setidaknya kalangan muda Indonesia, akan menghargai pentingnya hukum dan kemerdekaan, dua konsep dasar kehidupan manusia kini dan masyarakat tempat kita hidup.³¹¹

Saya mohon bangsa Indonesia mengerti bahwa sejalan dengan prinsip universal dan hukum internasional, Timor-Leste seharusnya menjadi wilayah tidak berpemerintahan berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan proses dekolonisasi.³¹²

Saya memohon kepada generasi baru Indonesia untuk memahami bahwa rakyat Timor-Leste lebih menghargai kebebasan, keadilan, dan perdamaian daripada apa yang disebut pembangunan.³¹³

373. Pada saat yang sama ia menerima dasar pemikiran di balik situasi yang ia gambarkan, bahwa nasibnya tidak bergantung pada kekuatan argumen yang ia berikan kepada pengadilan, tetapi pada kesediaannya untuk tunduk kepada keinginan politik pihak-pihak yang, dalam perkataannya, telah "mendalangi" pengadilannya. Xanana Gusmão mengatakan kepada Komisi, "Semuanya sudah diatur. Pengadilannya mengikuti suatu strategi, sehingga menjadi sandiwara politik."³¹⁴ Tanggapannya atas situasi ini merupakan suatu pembangkangan politik sekaligus bantahan hukum, sebagaimana terindikasi dalam beberapa komentar dalam eksepsi pembelaan yang dia tulis:

Saya tidak akan pernah bisa membenarkan aneksasi kriminal Timor-Leste, hanya agar dapat hidup beberapa tahun lagi lamanya.

Perjuangan saya lebih berharga dari hidup saya. Bangsa Timor-Leste telah mengorbankan hidupnya dan terus menderita.³¹⁵

Mulai hari ini saya akan mulai mogok makan sebagai cara praktis untuk memohon kepada Komisi Eropa dan pemerintah Amerika Serikat dan Australia. Tidak akan pernah ada kesepakatan yang bisa dicapai antara orang yang dipenjara dan pemenjaranya...³¹⁶

Sebagai tahanan politik di tangan penjajah, tidak ada pengaruhnya bagi saya bila saya dihukum mati sekalipun oleh pengadilan ini. Mereka telah membunuh lebih daripada sepertiga penduduk Timor-Leste yang tidak berdaya; mereka sedang membunuh bangsa saya, dan saya tidak lebih berharga daripada perjuangan gagah-berani Bangsa saya itu.³¹⁷

374. Pleidoi Xanana Gusmão adalah dokumen bersejarah yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Timor-Leste untuk merdeka. Dari dalam sel penjara, Xanana Gusmão meracik sejumlah argumen yang kuat secara hukum, politik, dan perasaan. Akan tetapi para hakim menganggap bahwa pernyataan ini tidak relevan bahkan sebelum mereka mendengar isinya.

Para hakim

375. Terdapat banyak indikasi bahwa para hakim tidak independen atau memihak. Hal ini terlihat jelas dalam penolakan mereka untuk mengizinkan Xanana Gusmão membaca keseluruhan pleidoinya. Seperti yang dijelaskan di atas, setelah tiga halaman dibacakan, majelis hakim beranggapan bahwa pernyataan Xanana Gusmão itu tidak relevan. Pada kenyataannya, meskipun kontroversial dan ditulis dengan kata-kata yang sangat kuat, pleidoi Xanana Gusmão ini mengangkat persoalan hukum yang mengena pada inti persoalan adilnya proses peradilan ini.

376. Para hakim tampaknya telah memikirkan bahwa argumen-argumen yang dikemukakan Xanana Gusmão bukannya tidak relevan, melainkan mengungkap masalah-masalah yang terlalu sensitif untuk disiarkan ke khalayak ramai. Ketika para terdakwa dalam sidang-sidang pengadilan politik sebelumnya membuat argumen serupa (meskipun dengan ungkapan yang tidak begitu langsung), relevansi argumen mereka tidak dipertanyakan. (Sebagai contoh, lihat kasus persidangan Gregório Saldanha dan Francisco Branco, dalam kasus Santa Cruz, paragraf 115 – 240.) Namun ketika terlihat argumen yang kontroversial akan muncul dalam pleidoi Xanana Gusmão, ia dibungkam. Ketokohnya dan publisitas seputar sidang ini mungkin saja menjadi faktor-faktor dalam putusan tersebut. Apapun alasan mereka mengeluarkan putusan tersebut, para hakim telah melanggar hak terdakwa untuk menyatakan pembelaannya menurut Pasal 182(1)(b) KUHAP.*

* Pasal 182(1)(b) KUHAP: "Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir."

377. Wawancara-wawancara yang dilakukan oleh *Asia Watch* menunjukkan bahwa para hakim tersebut juga bertindak tidak profesional dalam hal-hal lain. Para hakim tampaknya tidak sadar bahwa beberapa saksi ada di dalam tahanan dan mungkin sedang menghadapi pengadilan mereka sendiri.³¹⁸ Lebih lanjut lagi mereka menyatakan, adalah di luar tugas mereka untuk menyelidiki dugaan bahwa para saksi telah dianiaya, dan menunjukkan bahwa perlakuan terhadap para saksi tidak memengaruhi bobot kesaksian mereka.³¹⁹ Keterangan para saksi dan BAP merupakan dasar bagi pengadilan pidana Indonesia. Dengan tidak memikirkan bahwa pernyataan para saksi mungkin telah terpengaruh oleh pemaksaan, para hakim tidak hanya melanggar hukum Indonesia, tetapi juga secara nyata mengurangi kemungkinan munculnya kesaksian yang meringankan Xanana Gusmão di pengadilan. Pasal 153(2)(b) KUHAP menyatakan bahwa hakim “wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas”. Apabila pasal ini dilanggar, keputusan tersebut harus dibatalkan menurut Pasal 153(4) KUHAP. Adanya dugaan bahwa keterangan saksi tidak diberikan dengan sukarela menunjukkan bahwa para hakim tidak menjalankan kewajibannya menurut KUHAP.

378. Kesan Xanana Gusmão ialah bahwa pengadilan terhadap dirinya telah direkayasa, dan bahwa para hakim sangat dipengaruhi oleh militer, intelijen, dan pemerintah Indonesia:

Dalam kasus saya, baik BAIS maupun Pemerintah Indonesia memutuskan mengambil risiko sekecil mungkin, dengan memanipulasi seluruh proses peradilan.³²⁰

Saya tahu bahwa BAIS sudah mengatur yang perlu untuk meloloskan saya dari hukuman mati, dan jika saya menerima integrasi saya akan dibebaskan.³²¹

379. Xanana Gusmão mengatakan kepada Komisi, menurut hematnya hakim-hakim itu juga telah dipengaruhi oleh militer:

*Saya melihat wajah mereka. Mereka [hakim-hakim] itu sepertinya takut kepada Kopassus.*³²²

380. Para hakim memutuskan bahwa Xanana Gusmão bersalah atas semua dakwaan pada 21 Mei 1993, dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya. Mengingat adanya indikasi campurtangan militer dan pemerintah sepanjang proses, mulai dari penangkapan ke penjatuhan hukuman, kemandirian dan ketidakberpihakan keputusan ini perlu dipertanyakan.

Pengajuan grasi

381. Xanana Gusmão menuduh pengacaranya, Sudjono, berbohong dengan bertindak berlawanan dengan kehendaknya dalam melanjutkan pengajuan grasi.

Sudjono mengunjungi Xanana Gusmão pada Juni 1993 untuk membicarakan grasi, dan saat Sudjono menjelaskan hal-hal tentang permohonan grasi kepada presiden, Xanana Gusmão menolak usulan tersebut: “Saya langsung menolak dan bilang ke dia, saya tidak terima hukuman apapun dari Pengadilan Indonesia.”³²³

382. Xanana Gusmão menjelaskan situasi ini lebih lanjut:

*Setelah itu Sudjono datang dan berbicara dengan saya, dia berbicara tentang grasi. Saya lalu bertanya, apa itu grasi. Dia menjelaskan grasi kepada saya. Kami tidak saling sepakat. Saya menyampaikan, bahwa saya tidak mengakui dia, karena saya mencari LBH dan tidak dapat. Lalu kami berdua berbicara lagi, saya meminta agar dia melakukan pembelaan terhadap kriminal politik saya. Setelah itu dia bilang, kita akan melakukan banding, dan harus ke pengadilan sekali lagi. Setelah itu kami menyampaikan bahwa bukan grasi tetapi banding.*³²⁴

383. Pada akhirnya Sudjono tampaknya dapat meyakinkan Xanana Gusmão untuk memasukkan pengajuan grasi, setelah meyakinkannya bahwa tidak akan ada publisitas, bahwa pandangan politik Xanana Gusmão tidak akan dipelintir, dan bahwa Sudjono bertindak atas inisiatifnya sendiri, bukan atas perintah militer. Dengan dasar jaminan-jaminan ini, Sudjono tampaknya mampu memengaruhi Xanana Gusmão untuk menandatangani surat yang ditulis oleh Sudjono dan memberi kuasa dalam surat tersebut untuk mengajukan grasi. Karena surat tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia, ada dugaan kuat bahwa Xanana Gusmão tidak sepenuhnya memahami implikasi surat tersebut, dan mungkin tidak akan setuju untuk mengajukan grasi. Namun demikian, pada 4 Juni 1993 Sudjono melanggar kesepakatannya dengan Xanana Gusmão, yaitu dengan mengumumkan kepada umum bahwa ia telah resmi mengajukan permohonan grasi, hal ini menyebabkan serangkaian pemberitaan di media massa.

384. Pada Agustus 1993, Presiden Soeharto mengabulkan grasi kepada Xanana Gusmão, dengan mengurangi hukumannya menjadi 20 tahun penjara.³²⁵ Xanana Gusmão benar-benar kecewa atas pemberian grasi tersebut: “Saya merasa jengkel dengan grasi, tidak diberikan pun saya tidak peduli.”³²⁶ Kemudian dalam suratnya kepada YLBHI tahun itu, Xanana Gusmão mengulangi penolakannya atas grasi yang diberikan: “Saya menolak grasi, karena ini bertentangan dengan prinsip-prinsip saya. Karena hal ini berarti saya menerima hukuman saya.”³²⁷

385. Laporan-laporan tentang insiden ini dalam media-media di Indonesia dapat menjelaskan motif Sudjono dan pihak penguasa Indonesia. Pada 5 Juni 1993 surat kabar *Kompas* memuat artikel bertajuk “Xanana Gusmão: Saya minta maaf” yang menyatakan, bahwa Xanana Gusmão menulis pleidoi pribadi untuk meminta grasi atas kehendaknya sendiri.³²⁸ Pada 6 Juni surat kabar *Surya* dan *Surabaya Pos* menerbitkan artikel berjudul “Xanana Gusmão mengakui manfaat integrasi Timor-Leste.”³²⁹ Dalam suratnya kepada YLBHI tertanggal 30 November 1993, Xanana Gusmão menyangkal apa yang dikatakan media tentang kejadian tersebut:

Saya tahu tentang manuver/siasat seputar grasi ini, yang menjadi kampanye propaganda yang luas dan intensif melalui radio dan pers.³³⁰

386. Penggambaran media tentang pengajuan grasi sebagai pengakuan Xanana Gusmão atas kekalahan perlawanan dan penerimaan pendudukan Indonesia tersebut konsisten dengan usaha-usaha sebelumnya untuk memanfaatkan penahanan dan pengadilan atas Xanana Gusmão untuk tujuan serupa. Pengajuan grasi tersebut mungkin saja disengaja untuk memperlakukan Xanana Gusmão dan menjatuhkan semangat rakyat Timor-Leste yang tengah berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Menjelang akhir persidangan, otoritas Indonesia tampaknya telah kehilangan kendali atas proses pengadilan, khususnya ketika Xanana Gusmão mulai membacakan pleidoinya yang menantang. Dengan menggambarkan pengajuan grasi tersebut sebagai pernyataan kekalahan Xanana Gusmão, otoritas Indonesia tampaknya berusaha memperoleh kembali kendali atas proses pengadilan.

Peninjauan Kembali

387. Setelah grasi diberikan, sekali lagi Xanana Gusmão berusaha mendapat penasihat hukum independen untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya. Namun sekali lagi pemerintah Indonesia berusaha mengalangnya. Ketika para pengacara LBH dilarang mengunjungi Xanana Gusmão di penjara, Direktur Jenderal Pemasarakatan Indonesia dilaporkan menyatakan:

Apa pentingnya Xanana Gusmão bertemu para pengacara LBH? Kalau semua orang yang mau [dibolehkan] datang, sel dia akan penuh.³³¹

388. Menteri Kehakiman mengambil posisi yang sama dengan menyatakan, bahwa siapapun dapat mengunjungi Xanana Gusmão, kecuali pengacara LBH. Alasan yang diberikan ialah karena tujuan kunjungan mereka tidak jelas.³³² Akhirnya Xanana Gusmão diizinkan bertemu dengan para pengacara LBH pada Maret 1994. Ketika itu ia menandatangani surat kuasa bagi para pengacara LBH untuk bertindak atas namanya dan memerintahkan mereka meminta peninjauan kembali.³³³ Sesudah itu para pengacara tersebut mengajukan permohonan peninjauan kembali. Penjelasan Menteri Kehakiman atas penolakan permohonan tersebut ialah bahwa proses hukum terhadap Xanana Gusmão telah selesai; dan bahwa mengulangi proses pengadilan dapat menjadi preseden buruk bagi pemerintah Indonesia.³³⁴

Vonis

389. Setelah pengadilan, Xanana Gusmão dibawa ke Semarang dan ditahan selama dua setengah bulan.³³⁵ Amnesty International melaporkan bahwa pada 27 Mei 1993 Xanana Gusmão memulai mogok makan dan tidak diizinkan menerima tamu, kecuali Sudjono, sejak ia dibawa dari pengadilan enam hari sebelumnya.³³⁶ Menurut Xanana Gusmão:

Saya melakukan mogok makan, sampai dua belas hari. Saya hampir sudah tidak bisa bertahan. Setelah itu mereka takut akan kemungkinan saya sakit, sehingga mereka membawa saya ke Cipinang.³³⁷

390. Pada Agustus 1993 Xanana Gusmão dipindah ke Cipinang. Pada 9 April 1994 ia menulis ke Amnesty International, mengeluh karena “dipermalukan, diganggu, dan diancam” setiap hari, dari pagi hingga malam.³³⁸ Kemudian ia menyatakan, bahwa tahanan pidana di Cipinang didorong untuk menghina dan melecehkannya terus-menerus:

Kalau saya menghindar berbicara, itu karena ‘saya takut’; jika saya meninggalkan sel dan kembali lagi, itu karena ‘takut’. Kalau mereka bicara sama saya, dan saya menanggapi, itu karena ‘saya takut’; lalu ada distorsi kata-kata dan ungkapan saya, manipulasi atas apa yang saya katakan, untuk memprovokasi dan mengejek saya, dll. Mereka menciptakan ‘cerita-cerita’ untuk para penjaga yang kemudian menertawakan saya.³³⁹

391. Dalam wawancara dengan Komisi, Xanana Gusmão membenarkan bahwa ia terus diganggu setelah kepindahannya ke Cipinang:

Mereka mulai menyuruh para tahanan lainnya dalam blok untuk memprovokasi, mengancam, dan menghina saya sebagai pembunuh, sehingga saya pun mulai mengerti kata “pembunuh” dalam bahasa Indonesia. Mereka selalu memprovokasi saya, sehingga saya menyampaikan kepada direktur penjara agar membawa saya dekat dengan teman-teman saya. Namun mereka tidak menghiraukan, dan saya sampai memukul dua orang. Baru mereka memindahkan saya ke blok lain, saya ditahan dalam sel besi selama lima hari dan tidak keluar, setelah itu mereka membiarkan kami sedikit bebas dalam tahanan.³⁴⁰

Kesimpulan

392. Pengadilan atas Xanana Gusmão melibatkan banyak pelanggaran proses hukum yang adil.

- Kondisi penahanan pra-sidang di Bali dan Jakarta, di mana ia sempat tidak diizinkan berhubungan dengan dunia luar selama 17 hari, dan penggunaan pelarangan tidur dan tekanan psikologis untuk mendapatkan informasi, dan memaksa Xanana Gusmão untuk membuat pernyataan di televisi bahwa ia telah meninggalkan komitmennya terhadap tujuan kemerdekaan dan menyerukan kepada rekan-rekan seperjuangannya untuk menyerah.
- Diingkari haknya untuk mendapatkan penasihat hukum selama 17 hari pertama. Xanana Gusmão kemudian dicegah untuk menunjuk pengacara

independen dan dipaksa menerima pengacara Indonesia yang sudah dikenal dekat dengan militer dan polisi.

- Selama masa penahanan pra-sidang, status Xanana Gusmão sebagai tahanan tidak dijelaskan. Dia tidak mendapat perlindungan sebagai tahanan sipil maupun sebagai tawanan perang, dan ditempatkan di wilayah hukum tak bertuan, di mana ia tidak diberi salah satu dari dua status di atas.
- Warga Timor-Leste tidak diberi akses bebas ke pengadilan di Dili. Beberapa pengamat internasional tidak diizinkan mengamati persidangan; mereka yang diizinkan hanya diberi akses terbatas ke persidangan.
- Penerjemahan yang tersedia sangat kurang.
- Sebagai akibat gagal menciptakan suasana di mana calon saksi meringankan dapat merasa aman untuk memberikan keterangan, ada alasan untuk percaya bahwa beberapa saksi memberatkan dalam penahanan, ketika memberi kesaksian mungkin telah mengubah kesaksiannya.
- Penasihat hukum yang ditunjuk untuk membela Xanana Gusmão menunjukkan kurangnya profesionalitas dan kemandirian dalam beberapa tahap penting selama sidang, yang sering tidak dapat dibedakan dengan perilaku tidak etis, seperti dalam penanganan permohonan grasi Xanana Gusmão.
- Para hakim menunjukkan tidak adanya kemandirian dan ketidakberpihakan, seperti tampak dari keputusan mereka bahwa pleidoi Xanana Gusmão tidak relevan, dan menimbulkan pelanggaran hak-hak sang terdakwa. Karena terdakwa menghadapi hukuman mati, sangat penting bahwa ia diberi perlindungan hukum yang penuh.

393. Mengingat pentingnya ketokohan terdakwa dan statusnya sebagai pemimpin perlawanan, pengadilan atas Xanana Gusmão juga merupakan pengadilan yang secara politis paling penting yang terjadi selama masa pendudukan Indonesia atas Timor-Leste. Komisi berkesimpulan bahwa karena itulah pihak penguasa Indonesia menyelenggarakan pengadilan ini demi mendapat modal politik sebesar-besarnya. Kenyataan bahwa tujuan itu tak senantiasa terpenuhi tak mengesampingkan fakta bahwa dengan mementaskan pengadilan tersebut, pihak penguasa telah samasekali gagal menjalankan kewajiban mereka terhadap terdakwa di bawah hukum Indonesia.

Pengadilan Mahkota, 1997

394. Pada Maret 1997, Sekretaris Jenderal PBB mengirim utusan pribadinya, Jamsheed Marker, ke Timor-Leste. Ketika mengetahui adanya kunjungan tersebut, panglima perlawanan Xanana Gusmão, yang tengah menjalani masa penahannya di penjara Cipinang di Jakarta meminta kepada David Dias Ximenes (alias Mandati) untuk menyampaikan sepucuk surat kepada semua organisasi klandestin. Surat tersebut menginstruksikan Vasco de Gama (alias Criado) dan Andre da Costa (alias L-4),

agar mengorganisasi sebuah demonstrasi publik dan melobi PBB melalui utusan Sekretaris Jenderal.³⁴¹ Aparat keamanan Indonesia di Timor-Leste mengetahui tentang rencana tersebut, dan pada 22 Maret 1997 menugaskan satu unit Polisi Militer untuk memblokir Hotel Mahkota, tempat utusan tersebut menginap, untuk mengantisipasi kemungkinan demonstrasi.

395. Menurut Celina Pires da Costa, demonstrasi tersebut bertujuan melobi Jamsheed Marker untuk penyelesaian secara damai terhadap masalah Timor-Leste.³⁴² Vasco da Gama mengatakan bahwa Xanana Gusmão telah mengirim sebuah surat melalui jaringan kurir yang menyerukan untuk mengadakan demonstrasi:

*Agar menunjukkan ke dunia luar bahwa walaupun pimpinan-pimpinan gerilyawan dan pimpinan klandestin untuk kemerdekaan, pejuang itu ditangkap ada yang mati, tetapi rakyat tetap tidak menerima kehadiran atau penguasa Indonesia. Jadi itu tujuan, untuk kemerdekaan nasional.*³⁴³

396. Para pendukung kemerdekaan mengadakan pertemuan persiapan pada 17 dan 22 Maret 1997 di rumah Andre da Costa untuk merencanakan demonstrasi pada 23 Maret 1997.³⁴⁴ Olga Amaral, Celina Pires da Costa, Thomás A Correia, dan lainnya hadir dalam pertemuan tersebut. Antara pukul 05.00 dan 08.00 pada 23 Maret 1997, sebuah demonstrasi terjadi di depan Hotel Mahkota, Dili Timur. Antara lima puluh sampai seratus demonstran mengusung spanduk-spanduk dan bendera Fretilin sambil berteriak, "Viva Xanana Gusmão, Viva Ramos-Horta, Viva Timor-Leste, Viva Povo Maubere."³⁴⁵ Demonstrasi yang awalnya direncanakan sebagai demonstrasi damai untuk menyampaikan harapan rakyat kepada perwakilan PBB, berubah menjadi ajang kekerasan dengan datangnya aparat keamanan Indonesia yang melepaskan tembakan, memukul para demonstran, dan melakukan beberapa penangkapan. Buntut dari protes tersebut, 33 orang diadili, umumnya dengan tuduhan makar. Karena dokumen-dokumen terkait telah hancur, Komisi tidak dapat mengumpulkan cukup informasi untuk secara terperinci menganalisis semua sidang dan putusan yang dihasilkan. Oleh karenanya yang akan menjadi fokus analisis berikut ialah sidang gabungan terhadap 16 dari 33 terdakwa.

Penangkapan

397. Kumpulan antara 50 sampai 100 demonstran di Hotel Mahkota mengundang intervensi polisi Indonesia, Brigade Mobil, agen intelijen (dalam pakaian sipil), dan pasukan anti-huru-hara. Mereka berusaha mengalangi massa yang ikut dalam demonstrasi. Anggota militer menjaga wilayah di sekitar pelabuhan, sekitar satu kilometer dari hotel. Ketika demonstrasi terus bergerak, anggota brimob dan agen intelijen mulai menembakkan pistol mereka ke arah para demonstran dan melukai beberapa orang pengunjung rasa.

* BAP Saksi Suhaedar, 29 Maret 1997, hal. 3: tindakan pengamanan ketat di Hotel Mahkota.

398. Pasukan keamanan menahan sekitar 43 sampai 60 orang.³⁴⁶ Mereka itu sebagian besar pelajar, pemuda, dan petani. Mereka semua dibawa ke Markas Polres (Polisi Resort) di Mercado Lama (Dili), dan ditahan di sel penjara.³⁴⁷ Sebagian dari demonstran yang terluka, seperti José Sarmento Boavida, ditangkap; sementara yang lainnya dapat melarikan diri dan bersembunyi di Gereja Motael. Sebagian lari ke biara Suster-Suster Canossian di Balide dan ke rumah Manuel Carrascalão. Abel José Ximenes dan demonstran lainnya yang bersembunyi di Gereja Motael belakangan ditangkap dan dibawa ke Polres Mercado Lama.³⁴⁸

399. Sebagian demonstran dipukuli oleh para polisi dan agen intelijen di lokasi kejadian, seperti Miguel Alves dan Celina Pires da Costa, yang dipukuli dengan batang besi dan ditendang sampai tidak sadar diri.³⁴⁹ Anacleto da Silva diserang secara brutal dan dipukuli dengan batang besi sehingga darah mengucur dari kepalanya. Ia juga ditendang pada bagian mulutnya, sehingga robek dan berdarah, kemudian ia dikurung di dalam sebuah toilet di Hotel Mahkota. Dari dalam ia melihat seorang polisi menembak José da Silva pada bagian pantat. Ia juga melihat polisi menelanjangi para korban, kemudian melemparkan mereka ke dalam truk, dan membawa mereka ke kantor polisi (Polres Dili).³⁵⁰

400. Aparat keamanan Indonesia menggunakan taktik brutal untuk melawan tindakan-tindakan yang mereka anggap sebagai tindak pidana melawan pemerintah Indonesia. Semua penangkapan yang dilakukan terhadap para demonstran dilakukan tanpa surat perintah penahanan resmi bagi para demonstran. Menurut KUHAP hal ini bisa saja sah karena para demonstran tertangkap-basah ketika sedang melakukan tindakan. Polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan setelah para demonstran dibawa ke Polres Dili pada 23 dan 24 Maret 1997.³⁵¹

401. Pada Juli 1997, beberapa bulan setelah insiden Hotel Mahkota, Satuan Tugas Garuda yang terdiri atas Rajawali (nama sandi untuk pasukan Kostrad: Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat), Kopassus, polisi, dan Koramil, menangkap Vasco da Gama (alias Criado) di rumahnya di Becora. Kapten PT5 dari Kupang, kepala unit operasional polisi, serta wakilnya, PT6, terlibat dalam penangkapan tersebut.³⁵² Vasco da Gama menceritakan penangkapannya:

*Pada saat saya ditangkap di rumah Becora, kaki dan tangan saya diikat, kemudian saya dipukul sampai jatuh dan kehilangan ingatan, saya dipukul mulai dari rumah sampai di Polda, saya didorong dari atas jatuh terguling-guling, mereka tanya saya tidak tahu apa-apa. Akhirnya drum penuh dengan air kasih masuk saya di dalamnya, dan ada yang saya minum.*³⁵³

402. Menurut Vasco da Gama (Criado), polisi tidak memperlihatkan surat perintah penangkapan resmi pada saat penangkapannya, walau demikian ia diberitahu alasan penangkapannya:³⁵⁴

Pertama karena saya seorang klandestin di Dili. Kedua, karena saya mengorganisir massa, dan memberi uang sebanyak Rp9.000.000,00 untuk demonstrasi Hotel Mahkota. Ketiga, saya menyerang Brimob dengan sepucuk senjata jenis M-16 dan tiga buah granat. Keempat, karena saya selalu kirim berita atau informasi ke luar negeri; kelima bahwa saya selalu berhubungan dengan orang-orang GPK seperti Conis Santana, David Alex, dan Matan Ruak; dan yang terakhir, bahwa semua aksi demonstrasi yang terjadi di bawah pimpinan saya.³⁵⁵

403. Pada hari demonstrasi itu terjadi, para demonstran baik yang menderita luka tembak parah, pemukulan, maupun luka akibat penyiksaan, dibawa ke Rumah Sakit Wira Husada (Lahane, Dili Barat) untuk menerima perawatan medis. Sebagian dari demonstran yang tidak terluka diinterogasi, sementara yang lainnya dibawa ke markas Polda. Beberapa kemudian dibebaskan karena keterlibatan mereka dianggap kecil; sementara lainnya dibebaskan setelah keluarga mereka melakukan intervensi. Setelah selesai, mereka yang dirawat di Rumah Sakit Wira Husada dibawa ke Polres, dan diinterogasi bersama dengan para tahanan lain.

Prasidang

404. Setelah penangkapan mereka, beberapa terdakwa dibawa oleh polisi, agen intelijen, serta brigade mobil ke Polres Dili. Di sini mereka sudah ditunggu oleh lebih banyak lagi petugas polisi dan brimob. Diduga bahwa para petugas tersebut mulai memukul dan menendangi para demonstran begitu mereka turun dari truk. Kemudian mereka semua disekap di dalam sel. Celina Pires da Costa menceritakan:

Kami dimasukkan dalam sel. Setelah satu jam atau dua jam, kami dibawa keluar untuk diperiksa, dipukul, ditendang, dan dibakar dengan rokok.³⁵⁶

405. Enam puluh orang ditahan di Polres. Polisi kemudian menelanjangi mereka sebelum menyerahkan mereka ke para agen intelijen untuk diinterogasi di sel-sel mereka. Nama para agen tidak diberitahukan. Para agen kemudian menginterogasi dan memukuli Amaro Pereira mulai pukul 01.00 sampai terbit matahari.³⁵⁷ Setelah itu, Amaro dipindah ke Polda Comoro dan dari situ ke Penjara Becora selang beberapa minggu kemudian. Sipir penjara menolak pemindahan Amaro lebih dini, karena ia menderita luka parah dan memerlukan perawatan medis secara intensif. Oleh karena itu Amaro sempat menghabiskan tiga hari di Rumah Sakit Wira Husada di Lahane, dan se usai menjalani perawatan, ia dikembalikan ke Polres, di mana ia menghabiskan satu minggu dalam penahanan sebelum dipindahkan ke Penjara Becora.³⁵⁸

406. Cerita Thomas Correia menggambarkan sejauh mana kekerasan dialami para tahanan:

Kami 11 orang terluka yang dibawa ke Wira Husada, dan pada 23 Maret 1997, kami ditangkap, dibawa ke Polres setelah disiksa. Hari itu juga, langsung dibawa ke Wira Husada. Sampai di sana Palang Merah Internasional langsung menyusul dan mendata nama kami. Tiga hari kemudian mereka melihat kondisi kami agak baik, dikembalikan ke Polres. Sebenarnya saya tidak termasuk 11 orang yang dibawa ke Wira Husada, karena saya tidak terluka saat aparat mengeluarkan tembakan. Namun karena saat ditangkap dibawa ke Polres, kemudian disiksa atau dipukul dengan “besi pipa”, sehingga saya terluka dan harus bersama mereka ke Wira Husada.³⁵⁹

407. Setelah tiga hari perawatan, Thomas Correia dan yang lain dibawa kembali ke Polres Dili untuk diinterogasi. Menurut Thomas A Correia, selama interogasi para tahanan disiksa:

Kami tetap diinterogasi dan disusul dengan penyiksaan-penyiksaan seperti setrum dengan listrik, bakar dengan puntung rokok, dipukul.³⁶⁰

408. Vasco da Gama (alias Criado) ditangkap dan dibawa ke markas Polda. Di sini ia disiksa secara fisik dan psikologis. Ia juga melihat orang-orang lain diikat:

Semua tuduhan itu saya tidak tahu, akhirnya saya ditarik masuk ke dalam sel. Begitu datang di depan sel, saya lihat Agustinho Carvalho, orang Ermera Hatulia, sudah diikat di depan, kaki diikat tersendiri dan tangan diikat tersendiri, Saya masuk ke dalam ruangan sel Polda lalu mereka interogasi, tidak lama kemudian tangan saya diikat ke belakang, saya dimasukkan dalam karung beras 50 kg dan kaki diikat dengan kursi, baru ditendang, dipukul.³⁶¹

409. Vasco da Gama menggambarkan teknik penyiksaan, misalnya dengan memegangi dan memelintir tahanan [sambil mengatakan] ‘rasakan ini,’ dan memelintir mereka sampai hampir jatuh ke lantai. Ia menambahkan:

Di situ satu orang yang berada di sisi saya, pukul saya langsung jatuh. Saya jatuh apakah lama atau tidak saya tidak tahu, saya sudah pingsan. Karena tangan saya diikat, mereka buka dan suruh duduk, kemudian mereka putar lagi, saya sampai pingsan lagi. Setelah sadar, saya bangun, mereka kasih masuk ke dalam sel nomor 5 di Polda.³⁶²

410. Orang-orang yang dicurigai ditahan di tahanan kepolisian selama 15 – 20 hari. Sepanjang waktu itu mereka disiksa baik fisik maupun mental, terutama selama interogasi. Sesudah 15 – 20 hari, sekitar 10 – 17 orang tahanan dibebaskan dan 33

orang' dipindah ke penjara Becora menunggu disidangkan.³⁶³ Di Penjara Becora mereka disekap dalam sel gelap selama satu minggu.³⁶⁴ Clementino dos Reis Amaral dan seorang koleganya, sebagai anggota-anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia atau Komnas HAM, mengunjungi para tahanan itu di Penjara Becora.³⁶⁵ Thomas Correia berkata:

*Bapak Clementino dos Reis Amaral datang, tetapi tidak berkata sepatah pun. Ia melihat pada keadaan fisik kami, dan pada waktu itu banyak yang belum sembuh samasekali dari luka-luka kami. Mereka mengambil foto kami.*³⁶⁶

411. Sampai dengan dimulainya persidangan, 33 terdakwa tersebut telah ditahan di tiga lokasi yang berbeda—Polres, Polda, dan Penjara Becora—selama tiga sampai empat bulan dalam penahanan prasidang.

Akses untuk pengacara

412. Di Polres Dili tahanan tidak diberi akses untuk pengacara independen. Pihak penguasa Indonesia menawarkan Abdul Hakim dari LBH Trisula di Kupang untuk menjadi pembela bagi Olga Amaral dan Celina Pires da Costa. Namun keduanya menolak.³⁶⁷ Abdul Hakim dari LBH Trisula sering ditunjuk oleh pemerintah Indonesia, dan banyak terdakwa serta pengacara independen yang tidak memercayainya. Thomás A Correia berkata:

*Ya, ada juga pengacara yang dipersiapkan oleh militer, tapi kami tidak mau. Kami hanya menerima pengacara Pak Aniceto Guterres, karena ia adalah pengacara yang baik dan independen.*³⁶⁸

413. Setelah pemindahan mereka ke Penjara Becora, para tahanan mendapat akses untuk pengacara independen melalui Yayasan HAK. Pengacara dari Yayasan ini menghubungi para tahanan dan menawarkan bantuan mereka.³⁶⁹ Namun demikian, Aniceto Guterres Lopes, yang juga Ketua Yayasan HAK, walaupun mendapat kuasa hukum dari keluarga para tahanan, tidak diberi akses untuk menemui klien-kliennya:

* Ke-33 tahanan itu ialah: Thomás A. Correia (Baucau/Laga), Mateus da Costa Belo (Baucau/Venilale), Olga Amaral (Turiscaí), Celina Pires da Costa (Baucau/Laga), Hermenegildo da Costa (Baucau/Laga), Cancio A. Henrique Guterres (Baucau/Venilale), Bendito Amaral (Liquiça a), Miguel Alves (Viqueque/Uatulari), Mariano da Silva (Baucau/Laga), José Sarmiento Boavida (Baucau/Quelicaí), Abel José Ximenes Baucau/Laga), Rafael de Almeida (Baucau/Laga), Moises Felisano Soares (Baucau/Venilale), Alipio Soares (Viqueque/Uatulari), Anacleto da Silva (Viqueque/Ossu), Mositu Fraga Soares Viqueque/Uatulari), Crispin da Silva (Ainaro) (Viqueque/Ossu), Alberto da Costa (Viqueque/Ossu), Amaro Pereira (Aileu), João Henrique (Aileu), Celestino Manuel Pereira (Baucau/Laga), Nelson Pereira Dili, Luis Bonanca (Dili), Constancio G. Leite (Maliana), Carlos Gusmão (Baucau/Laga), Aleixo da Silva Ximenes (Baucau/ Laga), Domingos da Costa (Baucau/Laga), José Gabriel (Baucau/Laga), Augusto Raimundo (Baucau/Laga), Jito Borges (Aileu), Mateus Ignacio da Costa (Baucau/Laga), Domingos Sarmiento (Viqueque), Romaldo Brazil Janeiro (Los Palos).

Mereka selalu menghalangi untuk tidak bertemu dengan klien kita, dan yang paling menghalangi adalah polisi. Polisi bilang mereka sudah punya pengacara. Dan saya juga bilang, meskipun mereka sudah punya pengacara yang ditunjuk, namun saya harus menjalankan tugas saya sebagai pengacara, di mana kuasa diberikan oleh keluarga dan terdakwa. Jadi hari ini saya mau bertemu dengan tersangka yang bersangkutan, atas nama keluarga. Maksudnya agar saya masuk sampai ke dalam, bertemu dengan klien. Saya bisa bertanya, apakah mereka yang beri kuasa atau dipaksa untuk tanda tangan surat kuasa, atau ditunjuk. Ternyata ditandatangani karena tekanan psikologis, pengaruh dari polisi, juga ketidaktahuan mereka. Tapi pada akhirnya tersangka tarik kembali surat kuasa yang diberikan kepada pengacara yang disediakan, kemudian diserahkan dan dipercayakan sepenuhnya kepada saya, lewat surat kuasa itu. Dan saya datang tunjukkan kepada Polisi, Jaksa, dan Hakim, tolong lihat. Mereka telah menyerahkan sepenuhnya kepada saya.³⁷⁰

414. Setelah pihak penguasa Indonesia menerimanya sebagai kuasa hukum para terdakwa, Aniceto Guterres Lopes mendapat akses mingguan untuk bertemu dengan para kliennya di Penjara Becora: “Pengacara Aniceto Guterres Lopes pergi melihat keadaan kami satu kali kunjungan dalam setiap minggu.”³⁷¹ Aniceto Guterres Lopes mengonfirmasikan bahwa “ini adalah kunjungan berkala yang terjadwal.”³⁷²

415. Akan tetapi mereka yang ditahan di Polda jauh lebih sulit mendapat akses untuk pengacara independen. Aniceto Guterres Lopes, yang juga mewakili Vasco da Gama (alias Criado) berangkat ke Polda untuk bertemu dengan kliennya, namun tidak diperbolehkan bertemu. Begitu juga dengan Johnson Panjaitan, seorang pengacara dari Jakarta, yang ditolak bertemu dengan kliennya.³⁷³

416. Pasal 54 dan 55 dari KUHAP dengan jelas memberikan ketentuan tentang seorang pengacara yang dipilih oleh tersangka dari awal proses hukum. Seperti halnya pada sidang-sidang pengadilan politik sebelumnya, ketentuan ini juga dilanggar.

Investigasi

417. Berita Acara Pemeriksaan atau BAP sepertinya telah didapat melalui pemaksaan. Apabila pemeriksa tidak puas dengan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, tersangka diancam akan ditembak. Menurut Celina Pires da Costa:

Habis saya bilang tidak tahu, tidak tahu, tapi mereka pukul terus dan mereka ancam akan menggantung dan menembak, kalau saya tidak jawab dengan jujur.³⁷⁴

418. Lebih jauh lagi, para tahanan dipaksa menandatangani BAP yang tidak benar dan tidak akurat, yang pada prinsipnya sudah disiapkan sebelumnya

oleh pemeriksa dari polisi dan dengan melibatkan personel dari pasukan khusus. Vasco da Gama (alias Criado), pemimpin demonstrasi Hotel Mahkota, menjelaskan:

Itu mengenai semua keterangan yang kita berikan pada waktu kita diperiksa yang ini. Jadi semuanya itu adalah pemaksaan “Obrigatorio”. Jadi tidak ada seorang pun ingin berbicara atas semauanya saja, untuk mengikuti sesuai dengan hal-hal apa yang mereka paksakan., Jadi sesuai dengan tuduhan-tuduhan yang ada di dalam, di tangan mereka. Berarti BAP atau keterangan yang kita berikan tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Dan hal ini mereka telah merancanginya sedemikian rupa, tunggu saja waktunya untuk menandatangani. Kemudian di dalam kepolisian, saya tidak tahu kok sampai komando yang periksa kami, kita diberi interogasi.³⁷⁵

419. Hal tersebut melanggar hak untuk diam yang dilindungi oleh pasal 66 KUHP.

420. Thomas Correia menjelaskan bahwa BAP-nya palsu karena para penyelidiknya menambahkan opini mereka ke dalamnya, dan menyiksanya untuk mendapat jawaban-jawaban yang diinginkan:

Berita Acara Pemeriksaan [BAP] yang mereka lakukan atau pertanyaan yang mereka tanyakan, saya menjawab tidak dimasukkan dalam BAP. Mereka menambah opini sendiri, sehingga pada akhir BAP mereka berikan, langsung ditandatangani, tidak membaca terlebih dahulu. Di samping itu ada polisi yang berdiri di samping kita [namanya tidak di sebutkan], kita jawab tidak jujur tetap memukul dan membakar dengan puntung rokok.³⁷⁶

421. Bahkan ia menyatakan, bahwa BAP-nya telah disiapkan sebelum interogasi:

Ya, mereka sudah tulis saya tinggal tanda tangani. Dan surat itu saya tidak tolak, langsung menerima, isinya saya lupa. Kemudian surat BAP waktu itu masih zamannya rezim Soeharto, jadi mereka siapkan semuanya. Waktu kami tandatangani bulan Juni 1997.³⁷⁷

422. Pengabaian harga diri manusia secara terang-terangan dengan menyiksa tahanan, dan melakukan ini untuk mendapatkan informasi tertentu, demikian juga dengan BAP yang sudah disiapkan sebelum pemeriksaan, jelas-jelas melanggar jaminan dalam KUHP bagi tersangka untuk memberikan informasi tanpa tekanan apapun. Dengan demikian tindakan para pemeriksa bukan hanya brutal, tetapi juga telah menentukan dasar dari semua prosedur selanjutnya: yakni sebuah persidangan di mana basis faktual untuk keputusannya sudah bersifat cacat.

Sidang pengadilan

423. Sidang gabungan terhadap 16 dari 33 tahanan dimulai pada 24 Juli 1997 dan setelah mengalami beberapa kali penundaan selesai pada 20 September 1997.

Dakwaan

424. Tuntutan primer bagi para terdakwa ialah melakukan makar:

Dakwaan primer bahwa 16 terdakwa bersama dengan terdakwa-terdakwa lain, yang perkaranya telah diajukan secara terpisah, atau yang masih belum tertangkap, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 1997, antara jam 06.30 sampai dengan jam 07.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 1997, bertempat di Hotel Mahkota Dili, Desa Colmera Dili Barat, Kabupaten Dili, atau pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dili, telah melakukan makar (*aanslag*), yang dilakukan dengan niat hendak menundukkan seluruhnya atau sebagian dari wilayah Indonesia (yi. Timor Timur), dan untuk menyerahkannya pada negara asing dengan tujuan untuk memisahkan dari Indonesia, atau untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.³⁷⁸

425. Tuntutan subsider, yakni menyatakan perasaan permusuhan terhadap Pemerintah Indonesia, juga disertakan sesuai pasal 154 dan 155 di dalam KUHP.³⁷⁹

426. Dakwaan mencantumkan sejumlah pertemuan yang diadakan untuk mempersiapkan demonstrasi di depan Hotel Mahkota pada 23 Maret 1997. Demonstrasi tersebut dituduhkan memiliki tujuan :

Untuk memperlihatkan pada utusan PBB dan wartawan asing, yang sedang menginap di Hotel Mahkota Dili, bahwa di Timor-Leste ada sekelompok masyarakat antiintegrasi yang masih aktif, dan bahwa rakyat Timor-Leste menginginkan kemerdekaan dari Indonesia.³⁸⁰

427. Di dalam dakwaannya, para terdakwa dituduh, di tengah berdemonstrasi itu, meneriakkan seruan-seruan seperti “Viva Xanana Gusmão, Viva Timor-Leste, Viva Ramos-Horta, Viva Fretilin, Viva Maubere.” Ini dilakukan dengan penuh semangat, di mana orang-orang dengan antusias mengacungkan kepala tangan mereka, sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum. Olga Amaral, José Gabriel, Augusto Raimundo Matos, dan lainnya dituduh mengibarkan bendera Fretilin dan 19 spanduk. Spanduk-spanduk tersebut mengandung slogan-slogan anti-Indonesia, di antaranya tuntutan untuk merdeka dari Indonesia.

428. Tujuh belas orang terdakwa lainnya yang disidang terpisah, juga didakwa atas tuntutan yang serupa. Vasco da Gama (alias Criado) didakwa dengan makar,

sementara tiga terdakwa lainnya, Marito Brafas Soares, Cancio A Henrique Guterres, dan Alberto da Costa (alias Barreto) dituduh, berdasar Pasal 154 KUHP, telah menyatakan perasaan permusuhan secara terang-terangan terhadap pemerintah Indonesia.

429. Terdakwa lainnya, termasuk di antaranya Lúis de Fatima Pereira, Domingos da Costa, Nelson Pereira, Anaro Pereira, Mateus da Costa Belo, Mariano da Silva, Muisés Feliciano Soares, Alipio Soares, Hermenegildo da Costa, dan Thomas Correia menghadapi dakwaan primer di bawah Pasal 154 dan dakwaan subsider di bawah Pasal 155 KUHP.³⁸¹

430. Perubahan kebijakan dari sidang individual ke sidang gabungan patut diperhatikan. Pada sidang-sidang pengadilan Santa Cruz dan Jakarta, sekelompok besar terdakwa disidang secara individual, walaupun akan lebih efisien apabila mereka disidang bersama-sama. Akan tetapi, dalam sidang pengadilan Mahkota, tampaknya karena mayoritas terdakwa hanyalah orang-orang biasa (pelajar dan petani) dan bukan anggota-anggota senior gerakan klandestin, hanya sedikit keuntungan yang didapat dengan menyidangkan mereka secara terpisah. Hal ini juga menjelaskan mengapa Vasco da Gama (Criado), organisator utama dari demonstrasi tersebut, disidangkan secara terpisah. Oleh karena itu tampak bahwa pihak penguasa Indonesia lebih memilih menyidangkan secara terpisah para terdakwa yang dianggap sebagai ancaman paling besar.^{*} Vonis-vonis ringan yang dijatuhkan kepada para terdakwa kemudian semakin memperkuat dugaan tersebut.

Keterbukaan sidang pengadilan

431. Pada 24 Juli 1997, hakim ketua menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum dan bahwa tindakan pengamanan yang ketat akan dilakukan selama masa sidang. Banyaknya anggota polisi, Kopassus, Korem, anggota militer, dan agen-agen pemerintah lainnya menyebabkan banyak warga Timor terlalu takut untuk datang. Sehingga walaupun sidang itu tidak tertutup, suasana menegangkan, yang disebabkan oleh banyaknya anggota pasukan keamanan yang hadir, secara efektif telah berhasil menghalangi anggota masyarakat mengikuti jalannya sidang.³⁸² Kegagalan menjamin sebuah sidang yang benar-benar terbuka untuk umum merupakan pelanggaran pasal 153(3) KUHP.

Saksi

432. Dari lima belas saksi yang diinterogasi selama investigasi, hanya lima yang memberikan kesaksian langsung pada saat sidang. Mereka semua saksi yang memberatkan dan tidak ada saksi meringankan yang hadir. Kebanyakan saksi yang

.....
* Komisi mengetahui tentang pengadilan politik lainnya di mana para tertuduh Timor Timur diadili bersama-sama—pengadilan tahun 1977 terhadap sebuah usaha pengeboman di Semarang. Kenyataan bahwa empat tertuduh dalam perkara ini semuanya mahasiswa biasa, dan semuanya dibebaskan dari dakwaan pemilikan tidak sah atas bahan peledak, memperkuat teori bahwa pengadilan terpisah cenderung lebih diutamakan terhadap tertuduh yang dipandang sangat membahayakan bagi para penguasa Indonesia.

memberatkan itu anggota kepolisian atau militer yang hadir pada saat demonstrasi. Kualitas bukti-bukti yang diberikan oleh para saksi yang memberatkan bersifat sangat umum dan tidak spesifik. Secara khusus, para saksi ini tidak bisa memberikan keterangan mengenai tindakan tertentu apapun yang telah dilakukan oleh masing-masing terdakwa. Salah satu contoh adalah penuturan Suhaedar, seorang anggota Polisi Militer:

Pada saat demonstrasi berlangsung, saya ada di Hotel Mahkota, kamar pengamanan no. 246 lantai 2. Saya diberitahukan oleh teman bahwa ada demonstrasi. Setelah saya turun, ternyata ada demonstrasi, dan saya menyaksikan dari jarak sekitar 2 meter. Para demonstran kurang-lebih 50 orang. Di sana saya melihat juga teman dari angkatan laut dan juga Intel. Selain itu saya juga melihat para demonstran meneriakkan Viva Xanana Gusmão, Viva Timor-Leste, Viva Maubere, Viva David Alex, dan saya sempat melihat 4 spanduk, di antaranya satu yang berwarna putih besar, dengan ukuran panjang kurang lebih 2 meter, lebar kurang lebih 1 meter. Sementara bunyi dari spanduk itu saya tidak melihat dengan jelas, karena saya membelakangi spanduk tersebut. Selain spanduk, yang digunakan ada juga kain, yang berupa bendera berwarna kuning, merah, dan hitam kemudian ada gambar bintang.³⁸³

433. Anggota polisi Soliquin, seorang saksi lainnya, memberikan keterangan bahwa:

Pada umumnya saya mengenal wajah-wajah yang mengikuti demonstrasi, kecuali mereka yang menutupi wajahnya dengan kain.³⁸⁴

434. Saksi-saksi lainnya menyatakan bahwa di antara para demonstran terdapat beberapa anggota pejuang Falintil.³⁸⁵

435. Kelima saksi memberatkan tersebut ialah Dede Kuswandi, I Ketut Sudarma Wiasa, Muhamad Saleh, Suhaedar, dan I Gede Redama.³⁸⁶ Aniceto Guterres Lopes menjelaskan mengapa hanya lima orang saksi yang dipanggil:

Ya pada saat persidangan hakim bertanya kepada jaksa penuntut, saksi yang hadir sudah cukup memberi keterangan untuk mewakili saksi lain, maka tidak perlu lagi menghadirkan saksi lain. Itu terjadi pada saat itu.³⁸⁷

Bukti-bukti

436. Sejumlah besar bukti-bukti fisik disita dari para terdakwa pada saat demonstrasi:

Dalam demonstrasi yang 23 Maret 1997, penguasa merampas 19 (sembilan belas) buah spanduk dari berbagai ukuran, dengan pesan (tertulis) dalam bahasa asing, 2 (dua) buah bendera Fretilin, 15

(lima belas) buah baju beraneka warna, 10 (sepuluh) buah celana berbagai warna.³⁸⁸

437. Pesan-pesan yang ditulis pada 19 spanduk yang disita menggunakan bahasa Portugis dan pada saat sidang Carlos Boromeu di bawah sumpah menerjemahkan pesan-pesan itu ke dalam bahasa Indonesia. Berikut ini beberapa contoh pesan dalam spanduk yang diserahkan sebagai barang bukti:

Bebaskan Xanana Gusmão dan semua tahanan politik Timor-Leste, Hidup Xanana Gusmão pembela generasi muda Maubere.

Dialog segitiga di bawah pengawasan PBB: Ikut-sertakan Xanana Gusmão untuk penyelesaian damai Timor-Leste.

Delegasi tetap Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Timor- Leste.³⁸⁹

Kinerja para pengacara

438. Tim pembela dari Yayasan HAK menghadapi kendala-kendala berat dalam usahanya untuk membela para kliennya. Salah satu masalah utamanya, menurut Aniceto Guterres Lopes, ialah karena ia tidak mempunyai hubungan yang erat dengan pihak militer:

Sebagai pengacara saya mempunyai hubungan yang baik dengan polisi, tapi tidak dengan militer dan intelijen.³⁹⁰

439. Aniceto Guterres Lopes menyebutkan kendala-kendala lainnya yang ia hadapi ketika membela para terdakwa:

Saya selalu menghadapi usaha-usaha dari pengadilan (hakim, jaksa) dan polisi untuk tidak menerima atau menghalangi pengacara independen. Mereka selalu menyediakan pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan.

Pembelaan saya selalu dipolitisir...Klien saya tidak mengerti, sehingga hakim memutar kalimat sedikit, dan klien sudah menerima pengacara yang ditunjuk. Bahkan dari luar hakim dan jaksa menyuruh polisi untuk mempengaruhi para tahanan, untuk tidak menerima pengacara independen; atau mereka katakan, Pak Aniceto Guterres Lopes kurang baik, kalian bisa dihukum berat.

Saya menghadapi proses yang tidak adil, penuh dengan kekerasan, tidak menghiraukan hak-hak terdakwa. Dan pada saat pengacara yang dipilih oleh keluarga dan tersangka, mereka melakukan intervensi, mereka berusaha menciptakan hambatan dengan berbagai cara. Seperti mengancam, membuat prosedur yang lebih rumit, prosedur lebih rumit seperti kita sudah ada surat kuasa dari keluarga dan tersangka, itu sudah sah untuk menjadi pembela. Tapi mereka (polisi) mempengaruhi

di tahanan dan membawa surat untuk ditandatangani dengan tujuan untuk memilih pengacara yang disediakan oleh mereka.³⁹¹

440. Aniceto Guterres Lopes juga menambahkan bahwa para pengacara telah melakukan segala upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin agar hak-hak terdakwa ditegakkan:

Mereka sudah mempersiapkan para “saksi” yang tidak melihat kejadiannya, tapi yang dalam BAP mereka katakan melihat insiden Hotel Mahkota. Hukum melarang praktik seperti ini, tapi tetap saja terjadi.³⁹²

441. Oleh karena itu, ketika para pengacara independen diperbolehkan bekerja, setelah melalui banyak interogasi, pihak penguasa Indonesia terus-menerus berusaha mengganggu dan merongrong hasil kerja mereka. Intimidasi seperti itu tentunya telah memengaruhi kemampuan para pengacara untuk membela klien mereka, dan karenanya telah berdampak pada adilnya persidangan tersebut.

Pembelaan

442. Substansi pembelaan difokuskan baik pada aspek prosedural maupun pada argumen historis yang luas. Kecacatan prosedur dan pelanggaran hak-hak tersebut berupa:

Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oknum penyidik, pada waktu penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan hak terdakwa untuk memperoleh BAP.³⁹³

443. Selanjutnya, penangkapan, penahanan, dan proses peradilan yang dijalankan dikatakan telah melanggar hukum karena tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku pada saat itu. Sehubungan dengan itu, pengacara para terdakwa, Aniceto Guterres Lopes menyatakan:

Mereka yang terlibat dalam gerakan klandestin sudah diketahui pasukan keamanan. Kemudian mereka ditangkap. Proses penangkapan, penahanan, dan [pada akhirnya] peradilan tidak adil, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP mengenai penangkapan dan penahanan tersangka. Dalam pembelaan, kegiatan klandestin dan demonstrasi mereka memiliki justifikasi yang sah, karena mereka tidak mengakui aneksasi Indonesia atas Timor-Leste. Oleh karena itu perjuangan mereka adalah sah, berdasarkan hak atas penentuan nasib sendiri, yang diakui oleh komunitas internasional.³⁹⁴

444. Seperti yang disorot dalam kutipan di atas, persoalan hukum internasional juga diangkat untuk memperkuat pembelaan yang diketengahkan:

Hukum internasional menyatakan bahwa pengakuan adalah hanya satu syarat dalam klaim suatu bangsa atas kedaulatannya. Dalam kasus integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia, menjadi sah dengan pengakuan setidaknya satu negara berdaulat lainnya. Sehingga semua keberatan yang diajukan oleh para pengacara mengenai integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia harus ditangani oleh PBB, sehingga tidak perlu dipertimbangkan oleh pengadilan ini.³⁹⁵

445. Walaupun banyak argumen pembelaan yang diangkat sudah benar, argumen-argumen tersebut ditolak dan sebagian besar bahkan tidak ditanggapi secara langsung.

Kinerja para hakim

446. Tampak bahwa kebebasan dan ketidakberpihakan hakim dalam sidang pengadilan Mahkota perlu dipertanyakan. Bukti-bukti yang ada pada Komisi menunjukkan adanya komunikasi antara para hakim dan pejabat keamanan Indonesia, yang mungkin telah memengaruhi hasil dari pengadilan tersebut. Rui Pereira, seorang pengacara, menyatakan bahwa:

*Sebelum kasus itu disidangkan, hakim sudah mendapat telepon dari Korem, Kodim, dan intelijen, hal ini sangat mempengaruhi kinerja seorang hakim.*³⁹⁶

447. Pernyataan ini kemudian dikonfirmasi oleh Aniceto Guterres Lopes yang mengatakan bahwa para agen intelijen:

*Sudah kontak dengan hakim di luar atau sebelum sidang untuk mempengaruhi keputusan hakim.*³⁹⁷

448. Lebih jauh lagi, Aniceto Guterres Lopes mempertanyakan mengapa aparat intelijen perlu ada di setiap sesi pengadilan setiap hari:

*Intel setiap hari berada di pengadilan itu untuk apa, memonitoring sidang dengan maksud memberi tanda atau perintah kepada hakim bahwa: Awas ini kasus penting, kami awasi terus, harus diputuskan sesuai ini. Dan intel polisi, Intel Kodim, intel SGI hampir setiap hari mereka di pengadilan, para intel itu apa hubungan dengan pengadilan, tidak ada, mereka hanya datang untuk memonitoring dan mempengaruhi keputusan.*³⁹⁸

449. Perilaku para hakim pada saat sidang semakin memperkuat kesan keberpihakan mereka. Menurut Aniceto Guterres:

Biasanya kami mengajukan keberatan kami di dalam atau di luar sidang; tetapi hakim tidak pernah memperhatikannya. Misalnya penuntut

umum membacakan tuduhannya selama sidang; dan sebagai pembela saya menjawab tuduhannya itu dengan mengatakan bahwa saya tidak memahaminya. Tapi hakim ketua tetap meneruskan sidang.³⁹⁹

450. Contoh lain dari kinerja para hakim yang menunjukkan keberpihakan ialah kegagalan mereka menjamin berlangsungnya sidang yang benar-benar terbuka untuk publik; dan kegagalan mereka memperhitungkan pengaruh ketidakhadiran pengacara pada waktu interogasi terhadap keabsahan BAP-BAP yang telah dibuat. Hal tersebut dapat melanggar kewajiban para hakim, menurut pasal 185(6) KUHAP, untuk menimbang kekuatan bukti.

451. Selanjutnya, menurut Vasco da Gama (Criado), tidak pernah ada harapan untuk sidang yang tidak memihak karena para hakimnya sendiri adalah musuh bagi mereka yang diadili:

Ya terus terang saja, bahwa musuh dengan musuh; kita kan musuh, tidak akan pernah memaafkan satu sama lain, kecuali ada proses itu sudah berlanjut, proses itu semua orang tahu, itu baru ada perubahan. Jadi saya lihat itu; memang ada di pengadilan itu dibuat oleh Pro-Integrasi. Kata lain bahwa, tidak ada tikus yang membela diri terhadap kucing, kalau kucing dapat, pasti dia makan; ini masalah besar.⁴⁰⁰

Keputusan dan vonis

452. Pada 20 September 1997, Hakim Ketua Agustinus Loto Runggum menjatuhkan vonis bagi keenam-belas terdakwa. Semuanya dinyatakan bersalah atas dakwaan primer yakni makar.⁴⁰¹

Berdasarkan bukti dan pertimbangan di atas, majelis hakim ini yakin bahwa dakwaan primer telah terbukti tanpa dapat dibantah lagi.⁴⁰²

453. Karena dakwaan primer telah dipenuhi, para hakim merasa tidak perlu mempertimbangkan dakwaan-dakwaan subsider.⁴⁰³

454. Enam belas terdakwa berikut dijatuhi hukuman satu tahun penjara atas pemberontakan, dan usaha untuk memisahkan diri dari Indonesia:

1. Celina Pires da Costa
2. Olga Amaral
3. José Gabriel
4. João Henrique (Elias)
5. Costancio G. Leite
6. José Sarmiento Boavida
7. Mateus da Costa Inacio
8. Bendito Amaral

9. Crispin da Silva (Anino da Silva)
10. Augusto Raimundo Matos
11. Domingos Sarmento
12. Rafael de Almeida
13. Zito Borges
14. Aleixo da Silva Ximenes
15. Anacleto da Silva
16. Abel Ximenes.⁴⁰⁴

455. Tujuh belas terdakwa yang disidang secara terpisah, juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara:

17. Masitu Fraga Soares
18. Cancio A. Henrique Guterres
19. Alberto da Costa (Barreto)
20. Luís Bonanca
21. Domingos da Costa
22. Nelson Pereira
23. Amaro Pereira
24. Miguel Alves
25. Ronaldo Brazil Januario
26. Carlos Gusmão
27. Celestino Manuel Pereira
28. Mateus da Costa Belo
29. Mariano Da silva
30. Moises Feliciano Soares
31. Alipio Soares
32. Hermenegildo da Costa
33. Thomas A Correia.⁴⁰⁵

456. Vasco da Gama (Criado) juga dinyatakan bersalah atas dakwaan primer dan menerima hukuman satu tahun penjara. Bagi semua terdakwa, hukuman satu tahun penjara tersebut dikurangi waktu yang telah dihabiskan di penahanan.

Banding

457. Para terdakwa menerima keputusan dari Pengadilan Negeri Dili dan menyatakan tidak berniat mengajukan banding.⁴⁰⁶ Vasco da Gama (Criado) menjelaskan:

Putusan pengadilan pada saat itu kami terima, teman-teman yang hadir, saya langsung terima, pada waktu itu saya langsung sampaikan di hadapan pengadilan, bahwa hukuman yang diberikan berapa tahun pun saya terima, karena itu adalah hak saya. Jadi kita tidak banyak bicara. Kami terima langsung, hukuman apa saja yang diberikan saya terima. Apa yang kami lakukan itu adalah hak saya. Kemudian mereka tanya saya, pada waktu itu, kalau begitu setelah keluar masih melakukan kegiatan Klandestin. Pada saat itu saya jawab bahwa ini tergantung daripada sikap kalian, dan sikap kalian yang kembali dari rezim orde baru.⁴⁰⁷

Kesimpulan

458. Pengadilan atas orang-orang yang terlibat dalam demonstrasi Mahkota pada Maret 1997 merupakan pengadilan terbesar terhadap penduduk sipil biasa (bukannya pemimpin klandestin) selama masa pendudukan Indonesia. Pada persidangan-persidangan sebelumnya, penguasa Indonesia memusatkan perhatian pada para organisator atau pemrakarsa aktivitas prokemerdekaan, yang biasanya adalah pemimpin senior prokemerdekaan. Maksud mereka untuk menjadikan para pemimpin tersebut contoh bagi yang lain sebagai upaya untuk mencegah aksi-aksi serupa di masa yang akan datang. Akan tetapi, sidang pengadilan Mahkota menunjukkan sebuah pergeseran dalam kebijakan. Sidang tersebut menjadikan sasaran peserta biasa dalam sebuah demonstrasi damai, dan mengadili mereka bersama-sama. Tampaknya telah terjadi penganiayaan berat dan penyiksaan selama masa penahanan prasidang, namun para terdakwa menerima hukuman satu tahun yang relatif lunak.

459. Alasan-alasan untuk perubahan kebijakan ini tidak seluruhnya jelas, namun hal ini dapat menunjukkan bahwa cara pendekatan sebelumnya yang menjadikan para pemimpin perlawanan sebagai sasaran, disadari tidak terlalu efektif. Walaupun para organisator demonstrasi Santa Cruz dan Jakarta telah dijatuhi hukuman yang berat, demonstrasi-demonstrasi politik masih terus terjadi. Untuk mengulangi pendekatan seperti ini dalam hal demonstrasi Mahkota, misalnya dengan hanya mengadili Vasco da Gama dan sejumlah individu utama lainnya, kemungkinan akan tetap tidak efektif. Dengan mengadili dan menyiksa sejumlah besar peserta demonstrasi, yang dijadikan sasaran adalah anggota-anggota klandestin reguler, dan diharapkan akan membawa pesan bahwa barang siapa, bukan saja para pimpinan, yang menyatakan sentimen anti-Indonesia, akan dihadapkan ke pengadilan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan yang relatif ringan juga menggambarkan bahwa walaupun para tahanan mengalami penyiksaan, pemerintah Indonesia ingin tampil lunak, barangkali sebagai respons atas kritik internasional terhadap vonis-vonis sebelumnya yang sangat berat, yang dijatuhkan kepada orang-orang seperti Gregório Saldanha. Hal ini dapat digambarkan sebagai pendekatan pedang bermata-dua: di satu sisi, mengadili

orang-orang biasa untuk kejahatan-kejahatan politik sehingga menunjukkan jangkauan dan legitimasi yang lebih luas dari hukum dan pengadilan Indonesia; di sisi lain, memberikan hukuman-hukuman yang lunak, untuk menjaga citra sebagai pemerintahan yang adil dan tunduk pada supremasi hukum.

460. Pelanggaran terberat terhadap prosedur hukum dalam pengadilan Mahkota di antaranya berupa digunakannya penyiksaan, khususnya terhadap Vasco da Gama dan Thomas A Correia; pemalsuan berita acara pemeriksaan; kegagalan untuk mengizinkan pengacara hadir selama interogasi; ketidakterbukaan sidang pengadilan; dan keberpihakan para hakim. Dengan demikian, tiga puluh tiga tersangka menghadapi proses di mana hak mereka atas pengadilan yang adil telah secara sistematis diingkari. Dalam pengadilan Mahkota, pihak penguasa Indonesia menghukum sejumlah besar warga biasa atas kejahatan-kejahatan politik, karena mereka ambil bagian dalam sebuah protes damai. Pengamalan hak-hak dasar mereka untuk mengungkapkan pendapat dan berserikat berakibat pada hukuman satu tahun penjara yang dihasilkan melalui sebuah proses yang tidak adil, dan dalam beberapa kasus juga melalui penyiksaan fisik.

Temuan

461. Komisi menemukan bahwa:

1. Walaupun sistem hukum Indonesia sebagian mulai berlaku di Timor-Leste sejak 1977, tidak ada lawan politik pendudukan yang diadili sebelum 1983. Pada saat itu dibuat suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana dan pengadilan sebagai alat untuk menghancurkan perlawanan terhadap kekuasaan Indonesia di Timor-Leste.
2. Pelaksanaan kebijakan ini tidak berarti bahwa metode-metode sebelumnya, seperti pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan terhadap para lawan politik, lalu dihentikan. Justru pengadilan digunakan sebagai sarana pelengkap, sebagai tambahan atas cara-cara lain yang sudah ada, untuk mencapai tujuan politik menghancurkan Resistansi.
3. Peran baru undang-undang dan pengadilan pidana bukan berarti bahwa sudah ada langkah untuk menghargai hak-hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pengadilan-pengadilan tersebut bukanlah pengadilan yang adil. Umumnya pengadilan-pengadilan tersebut merupakan 'pengadilan sandiwara', yang dalam banyak hal serupa dengan pengadilan-pengadilan yang dilaksanakan di bawah pemerintahan diktator militer di negara-negara lain. Vonis atas mereka yang didakwa tidak pernah dipertanyakan. Pengadilan sebagian besar berfungsi sebagai alat propaganda, yang dirancang untuk memberikan ilusi keadilan yang menyelubungi penindasan yang kejam atas para lawan politik.

4. Metode utama yang diterapkan untuk memastikan bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sekaligus membuat proses peradilan tidak terlihat bobrok seluruhnya, ialah dengan merekayasa dan membatasi bukti yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan. Rekayasa ini melibatkan penyiksaan dan intimidasi terhadap para terdakwa untuk mengorek pengakuan, mengajukan kesaksian yang dibuat-buat dari saksi militer dan saksi polisi, membuat bukti material palsu, menghalangi saksi meringankan untuk datang ke pengadilan, dan menunjuk pembela yang tidak akan sungguh-sungguh menentang pengaduan jaksa.
5. Tingkat kebobrokan proses peradilan yang dirancang untuk memberi selubung legitimasi atas vonis bersalah yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan telah didikte oleh tujuan politik, tampak dalam ringkasan berikut mengenai gelombang pertama pengadilan politik dari 1983 hingga 1985. 232 pengadilan politik diteliti oleh Komisi. Hasil penelitian itu ialah:
 - 232 vonis dengan tuduhan terlibat makar dan subversi
 - 232 tertuduh diwakili oleh pembela yang ditunjuk pemerintah
 - 0 saksi meringankan dipanggil
 - 0 kasus dibebaskan dari semua tuduhan yang tercatat
 - 0 permintaan banding terhadap vonis diajukan
6. Komisi menemukan bahwa dinas intelijen pasukan militer Indonesia terlibat dalam mengendalikan hasil pengadilan-pengadilan politik pada tiap tahap proses interogasi dan peradilan.
7. Komisi menemukan bahwa anggota militer yang menggunakan teror dan penyiksaan saat menginterogasi tahanan, polisi yang mempersiapkan perkara, jaksa yang mengajukan perkara di pengadilan, penasihat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan yang tidak melakukan segala daya upaya untuk membela klien mereka, dan para hakim yang diam saja dan membiarkan pelecehan yang luarbiasa dan berulang kali terhadap keadilan, semuanya terlibat dalam kolaborasi dan kolusi yang dirancang untuk memastikan bahwa para terdakwa tidak mendapatkan pengadilan yang adil.
8. Petugas militer Indonesia secara sewenang-wenang menahan para lawan politik pendudukan, dan menahan mereka dalam masa penahanan yang panjang, kadang sampai bertahun-tahun, sebelum diajukan ke pengadilan, meskipun dalam banyak kasus hanya ada sedikit atau tidak ada samasekali bukti melawan mereka.
9. Anggota militer Indonesia biasa menggunakan penyiksaan dan intimidasi sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan dan informasi lain. Hasil yang didapat dari penyiksaan dan intimidasi digunakan sebagai bukti dalam pengadilan.
10. Banyak dari mereka yang disiksa juga diancam akan ditahan tanpa batas waktu, serta terus disiksa dan dianiaya apabila mereka tidak bekerja sama dan mengaku bersalah. Sebagai akibatnya mereka menandatangani

pengakuan keterlibatan mereka dalam gerakan prokemerdekaan, meskipun belum tentu hal ini benar. Mereka juga mengajukan bukti melawan orang-orang lain, yang banyak di antaranya sebenarnya tidak mereka kenal.

11. Anggota pasukan keamanan Indonesia biasa menandatangani pernyataan palsu yang memberikan bukti melawan para terdakwa pengadilan politik dan bersumpah palsu dalam pengadilan orang-orang tersebut.
12. Anggota pasukan keamanan Indonesia juga biasa merekayasa bukti-bukti material, contohnya menunjukkan senjata yang tidak ada hubungannya dengan kasus tertentu, untuk memperkuat bukti yang dibutuhkan untuk penuntutan.
13. Anggota pasukan keamanan Indonesia tidak memberitahu para tersangka bahwa informasi yang mereka berikan akan digunakan untuk melawan para tersangka itu sendiri di pengadilan, dan bahwa mereka berhak atas hadirnya seorang penasihat hukum menurut hukum Indonesia dan hukum internasional.
14. Anggota pasukan keamanan Indonesia sering menginterogasi para tersangka dan memaksa mereka menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang telah direkayasa dan ditulis tanpa alih bahasa dari bahasa Indonesia yang tidak sepenuhnya dipahami para tersangka.
15. Para terdakwa biasa tidak mendapatkan hak memilih sendiri penasihat hukum untuk membela mereka di pengadilan. Dalam sebagian besar kasus, pembela yang ditunjuk oleh pengadilan samasekali tidak mengajukan saksi yang meringankan dan tidak benar-benar memberikan pembelaan bagi klien-klien mereka.
16. Dalam sejumlah kecil kasus, para pembela independen, yakni para pengacara dari lembaga bantuan hukum Indonesia dan para pengacara Timor yang memberikan bantuan hukum, dengan berani memberikan pembelaan secara profesional bagi para klien mereka. Mereka melakukan hal ini untuk menegakkan prinsip keadilan, meskipun mengalami intimidasi dan dituduh tidak patriotik, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta menghadapi kendala-kendala lain seperti kurangnya waktu untuk mempersiapkan kasus.
17. Selama pengadilan terhadap lawan politik, jaksa selalu mengabaikan persoalan etis yang muncul berkenaan dengan bukti yang diajukan di pengadilan. Hal ini termasuk bukti-bukti berupa pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan dan bukti-bukti yang jelas-jelas direkayasa.
18. Para hakim yang mengetuai sidang-sidang pengadilan politik gagal melaksanakan tugas mereka untuk membuat putusan yang independen dan objektif. Para hakim ini berperan besar dalam sistem hukum dengan membiarkan posisi penting mereka yang mendasar dimanipulasi sebagai alat politik operasi intelijen militer.
19. Para hakim yang mengetuai pengadilan politik mengizinkan diajukannya bukti yang dibuat-buat tanpa menyatakan keberatan. Mereka tidak menganggap tuduhan penyiksaan dan intimidasi terhadap para saksi sebagai persoalan yang serius. Mereka kerap mendasarkan vonis bersalah yang mereka putuskan pada Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani

sebagai hasil penyiksaan, dalam kondisi-kondisi yang ilegal. Para hakim juga mengabaikan permintaan para terdakwa untuk diwakili oleh pengacara pilihan mereka.

20. Mereka yang didakwa melakukan pelanggaran politik menerima hukuman yang tidak sesuai dengan tingkat kepidanaan tindak kejahatan yang dituduhkan. Dalam beberapa kasus hal ini menghasilkan hukuman penjara selama bertahun-tahun, untuk tindakan-tindakan seperti memasok sedikit makanan dan rokok kepada orang-orang yang dituduh menjadi lawan pemerintah pendudukan. Waktu yang dihabiskan di dalam penahanan militer, yang dapat mencapai hingga tujuh tahun dalam kasus yang paling ekstrem, umumnya tidak diperhitungkan saat hukuman dijatuhkan.
21. Tidak ada proses banding yang berarti bagi mereka yang dituduh melakukan pelanggaran politik.

Catatan Akhir

1. Konvensi Jenewa IV, Pasal 64.
2. Lihat, misalnya Pasal 68 Konvensi Jenewa IV.
3. Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. CAVR, wawancara dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
5. Amnesty International, *Unfair trials and possible torture in East Timor*, Desember 1985.
6. *Country Reports on Human Rights Practices for 1984*, Laporan disampaikan pada Komisi Hubungan Luar Negeri, Senat A.S., Februari 1985.
7. Berkas Perkara Ze Roberto S.M.J: No. 57/Pid/B/B4/PN.DIL.
8. Berkas Perkara Ze Roberto S.M.J: No: 57/Pid/B/B4/PN.DIL. Dokumen-dokumen menunjukkan, bahwa ini melalui Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara No. Pol. SPRIN/33/II/84 tanggal 14 Februari 1984 tentang penugasan Anggota POLRI pada Task Force POLRI di POL WIL TIM-TIM.
9. Berkas Perkara Ze Roberto S.M.J: No.57/Pid/B/B4/PN.DIL.
10. Lihat Berita Acara Pemeriksaan 9 April 1984, dalam Berkas Perkara Henrique Belmiro, No.83/Pid/B/84/PN.DIL.
11. Berkas Perkara David Dias Ximenes, No.22/Pid/B/84/PN.DIL.
12. Lihat misalnya artikel 9(3) Kovenan Internasional tentang Hak Politik dan Hak Sipil, yang mana merefleksikan Hukum Kebiasaan Internasional, dan artikel 71 Konvensi Jenewa IV.
13. Wanselan G. Carvalho, Balenti Nunes dan Salestino Dalosesat; Lihat Berkas Perkara David Dias Ximenes, No.22/Pid/B/84/PN.DIL.
14. Surat Satgas Intel Kolakops Timor Timur No: R/463/III/1984, 24 Maret 1984.
15. CAVR, wawancara dengan Caetano de Sousa Guterres, Dili, 22 Mei 2004.
16. Pernyataan HRVD 8055.
17. CAVR, wawancara dengan Aquelelino Fraga Guterres, alias Ete Uco, Baguia, Baucau, 17 Mei 2004.
18. Pernyataan HRVD 6983.
19. CAVR, wawancara dengan Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 17 Mei 2004.
20. "Is It Wrong for a Child to Return to the Mother who Gave it Birth?," *Sinar Harapan*, 3 September 1985, Ringkasan terjemahan Amnesty International dalam: *Unfair trials and possible torture in East Timor*, Desember 1985.
21. CAVR, wawancara dengan Antonio Tomás Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004.

22. Amnesty International, *East Timor: Unfair Trials and Further Releases of Political Prisoners* (ringkasan), April 1988.
23. Cristiano da Costa, pernyataan yang diberikan kepada Komisi Hak Asasi Manusia, Sidang Ke-44 (nomor 12), 1988.
24. Neil Barrett, wawancara dengan David da Conceição, The Neil Barrett Comarca Video Project, Submisi untuk CAVR, Agustus 2002.
25. Sebagai contoh, lihat Berkas Perkara Abilio Tilman, 72/PID.B/1983/PN.Dil, dan Berkas Perkara Martinho Soares, 119/Pid/85/PN.Dil.
26. Arsip Perkara João Soares, 24/Pid/B/84/P.N.DIL.
27. Surat tuntutan José Simões, No.01/PK-23/1984, 23 Januari 1984.
28. Contoh Henrique Belmiro, 83/Pid/B/84/PN.Dil; dan Keputusan Perkara Armindo Florindo, Keputusan No. 43/PID.B/1984/PN.Dili.
29. Berkas perkara Henrique Belmiro, No.83/Pid/B/84/PN.DIL.
30. CAVR, wawancara dengan Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004.
31. CAVR, wawancara dengan Marito Reis, 17 November 2002, Baucau.
32. Berkas perkara Henrique Belmiro, 83/Pid/B/84/PN.DIL.
33. Berkas perkara Armindo Florindo, No.43/Pid.B/1984/PN.DIL. Lihat khususnya Surat Tuduhan No. 41/PK/1984, 12 Mei 1984.
34. Keputusan atas Caetano De Sousa Guterres, No.51/Pid/B/1984/PN.Dil, 29 Mei 1984.
35. Keputusan atas David Dias Ximenes, 22/Pid/B/1984/PN.Dil.
36. Pengumuman Keputusan Pengadilan Dili tentang Domingos Seixas, Kasus No.18/Pid/B/84/PN/DIL.
37. Berkas Perkara Francisco Mendez No.170/Pid/B/84/PN.DIL; lihat terutama tuduhan No.49/B/12/1984, hal. 1; Surat Tuntutan No.49/B/2/1985, hal. 1; dan Pengumuman Keputusan No.170/PID/B/1984/PN.DIL, hal. 2:
38. Pengumuman Keputusan Pengadilan Negeri Dili atas Francisco Mendez No.170/PID/B/1984/PN.DIL. hal. 2.
39. Berkas perkara Jil Fernandes, No.179/Pid/B/85/PN.DIL.
40. "Hau hakarak hatoo, too ohin loron , hau tama iha komarka, tamba iha tempo ida nee hau, ami hamutuk forma duni ami nia estrutura ida hanesan klandestina atu fo ajuda ba registencia armada. Maibe apoio nebe mak hanesan ami fo ba sira hanesan informacao, estafeta no mos logistico." Neil Barrett, wawancara dengan Maria Immaculada, *Comarca Video Project*, Submisi pada CAVR Dili, Agustus 2002.
41. Pengumuman Keputusan Pengadilan Dili dalam hubungannya dengan Ze Roberto, Miranda Jeronimo Berkas perkara No.57/Pid/B/84/PN.DIL.
42. Surat tanggal 30 April 1984 Ali Alatas kepada Thomas Hammarberg, Sekretaris Jenderal Amnesty Internasional.
43. CAVR, wawancara dengan Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004, hal. 12.
44. CAVR, wawancara dengan Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004, hal. 16.
45. Pernyataan Amnesty Internasional kepada Komite Khusus PBB tentang Dekolonisasi (ringkasan), Agustus 1990.
46. Surat 30 April 1984 Menlu Ali Alatas pada Thomas Hammarberg, Sekjen Amnesty International.
47. Berkas Perkara 170/Pid/B/84/PN.DIL.
48. Penetapan PN Dili, UM 08.04.04, 7 Januari 1984.
49. CAVR, wawancara dengan Marito Reis, Baucau, 27 Mei 2004, hal. 9.
50. CAVR, wawancara dengan Marito Reis, Baucau, 27 Mei 2004, hal. 5; dan dengan Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004, hal. 13.
51. Pembelaan, Berkas perkara Henrique Belmiro No.83/Pid/B/84/PN.DIL.
52. Pembelaan dalam perkara pidana No.22/Pid/B/1984/PN.Dili, 23 Maret 1984.
53. Berita Acara, Pemeriksaan Persidangan, No.57/Pid/B/1984/PN.DIL, hal. 10.
54. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pleidoi Pembela, dalam perkara No.64/PK/1983 atas nama Terdakwa Abilio Tilman, 14 Desember 1983.

55. FEER, 8 Agustus 1985; dalam Amnesty International, *Unfair trials and possible torture in East Timor*, Desember 1985.
56. CAVR, wawancara dengan Caetano Guterres, 22 Mei 2004.
57. CAVR, wawancara dengan Caetano de Sousa Guterres, Dili, 22 Mei 2004.
58. Pernyataan Cristiano da Costa, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-44 (butir 12), 1988.
59. FEER, 8 Agustus 1985, dalam Amnesty International, *Unfair trials and possible torture in East Timor*, Desember 1985.
60. Lihat Berkas Perkara Abilio Tilman (No 72/Pid/B/83/PN.DIL.), Caetano Guterres (No.51/Pid/B/1984/PN.DIL.), José Simões (No. 03/Pid/B/84/PN.DIL.).
61. Pengumuman Keputusan Pengadilan Negeri Dili tentang Martinho Soares, No.119/Pid/85/PN.DIL, 1 Agustus 1985. Tiga halaman pembelaan diserahkan oleh Merry Doko dan Asmah Achmad pada 27 Juli 1985.
62. Berkas perkara Martino Soares, No.119/Pid/85/PN.DIL, 1 Agustus 1985.
63. Berkas perkara Henrique Belmiro, No.83/Pid/B/84/PN.DIL.
64. Ibid.
65. Country Reports on Human Rights Practices for 1984, laporan yang diberikan pada Komite Hubungan Internasional, Senat A.S., Februari 1985.
66. Keputusan Pengadilan Negeri Dili untuk Markus Assis, 115/Pid/B/1984/PN.DIL, 10 November 1984.
67. "Is it Wrong for a Child to Return to the Mother who Gave it Birth?" *Sinar Harapan*, 3 September 1985, diterjemahkan dan dikutip dalam Amnesty International, *Unfair trials and possible torture in East Timor*, Desember 1985.
68. Ibid.
69. Amnesty International, *East Timor: Unfair Trials and Further Releases of Political Prisoners* (ringkasan), April 1988.
70. CAVR, wawancara dengan Johnson Panjaitan, Dili, 14 Mei 2004.
71. CAVR, wawancara dengan Mario Carrasacalao, Dili, 30 Mei 2004, hal. 3.
72. CAVR, wawancara dengan Marito Reis, Baucau, 27 Mei 2004, hal. 10.
73. Surat Ali Alatas, 30 April 1984, pada Thomas Hammarberg.
74. Amnesty International, *East Timor: Fair Trials and Further Releases of Political Prisoners* (ringkasan), April 1988.
75. "Is it Wrong for a Child to Return to the Mother who Gave it Birth?", *Sinar Harapan*.
76. Wawancara CAVR dengan Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 28 April 2004.
77. Amnesty International, *East Timor: Unfair Trials and Further Releases of Political Prisoners* (ringkasan), April 1988.
78. Amnesty International, *Indonesia/East Timor: Santa Cruz: The Government Response*, 6 Februari 1991, hal. 9.
79. Amnesty International, *Indonesia/East Timor: In Accordance with the Law: Statement to the United Nations Special Committee on Decolonization*, Juli 1992, hal. 5.
80. Francisco Branco, *Pernyataan untuk Bagian Kejahatan Berat*, 15 Mei 2001.
81. Amnesty International, *Indonesia/East Timor: In Accordance with the Law*, hal. 2.
82. Berkas perkara Gregorio Saldanha 13/PID.B/1992/Pd. Dili, Pengumuman Keputusan pengadilan Dili Putusan hal. 153.
83. Ibid., Putusan, hal. 156.
84. Komisi Untuk Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-51, "Laporan Mr. Bruce Waly Ndiaye, Pelapor Khusus, tentang misinya ke Indonesia dan Timor Timur, 3-13 Juli 1994", 1 November 1994, hal. 5.
85. Ibid.
86. Amnesty International, *East Timor: The Santa Cruz Massacre*, (tanggal tak tertulis), hal. 2.
87. Amnesty International, *Indonesia/Timor-Timur: Fernando "Lasama" de Araújo Tahanan Hati Nurani*, Mei 1993, hal.2
88. Gregorio Saldanha, *Pernyataan untuk Unit Kejahatan Berat*, 31 Maret 2001.
89. Jacinto Alves, *Pernyataan untuk Unit Kejahatan Berat*, 11 Juni 2001.
90. CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 24 November 2002.
91. CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 30 Juli 2004.

92. Bonifacio Magno, Pernyataan untuk Unit Kejahatan Berat, Dili, 21 Juni 2001.
93. CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 30 Juli, 2004.
94. Bonifacio Magno, Pernyataan untuk Unit Kejahatan Berat, Dili, 21 Juni 2001.
95. Gregorio Saldanha, Pernyataan untuk Unit Kejahatan Berat, Dili, 31 Maret 2001.
96. CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 24 November 2002.
97. CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 1 Agustus 2004
98. CAVR, wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Mei 2004.
99. Ibid.
100. CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 24 November 2002.
101. CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 1 Agustus 2004.
102. CAVR, wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Mei 2004.
103. CAVR, wawancara dengan Gregorio Saldanha, Dili, 4 Juni 2004.
104. Berkas Perkara Gregorio Saldanha 13/PID.B/1992/PD.Dili, transkrip persidangan, hal. 99.
105. Berkas Perkara Greorio Saldanha 13/PID.B/1992/PD.Dili, Keputusan, hal. 169.
106. Amnesty International, *Indonesia/East Timor: In Accordance with the Law: Statement to the United Nations Special Committee on Decolonization*, Juli 1992, hal. 3.
107. CAVR, wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Mei 2004.
108. Amnesty International, *Indonesia/East Timor: Political Prisoners and the "Rule of Law"*, Januari 1995, hal. 10.
109. CAVR, wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Agustus 2004.
110. Ibid.
111. CAVR, wawancara dengan Gregorio Saldanha, Dili, 4 Juni 2004.
112. CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 1 Agustus 2004.
113. Berkas Perkara Francisco Branco, 14/PID.B/ 1992/PD.DIL. Interogasi Francisco Branco 13-15 Januari 1992, hal. 1.
114. Berkas Perkara Francisco Branco, 14/PID.B/1992/PD.DIL., Transkrip Sidang, hal. 3.
115. Buletin YLBHI, Forum Hak Asasi Manusia Indonesia, No.4/1992 April-Juni 1992, hal. 16.
116. Berkas Perkara Francisco Branco, 144/PID.B/1992/PD.Dili. Transkrip sidang, hal. 7.
117. Telegram yang dimaksud dalam sidang Gregorio Saldanha, lihat data kasus Gregorio Saldanha 13/ PID.B/1992/PD.Dili, Transkrip sidang, hal. 18.
118. Amnesty International, *Indonesia/East Timor: In Accordance with the Law: Statement to the United Nations Special Committee on Decolonization*, Juli 1992, hal. 3.
119. Lihat KUHP Ps. 55(1).
120. Lihat KUHP Ps. 110(1).
121. CAVR, wawancara dengan Gregorio Saldanha, Dili, 4 Juni 2004.
122. CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, 1 Agustus 2004.
123. CAVR, wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Mei 2004.
124. Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-49, Situasi di Timor Timur: Laporan Sekretaris Jenderal, 10 Februari 1993, hal. 15.
125. International Commission of Jurists, "Tragedy in East Timor", Oktober 1992, ringkasan dalam Commission on Human Rights, Sidang ke-49, *ibid.*, hal. 14-15.
126. Commission on Human Rights, Sidang ke-49, *ibid.*
127. Berkas Perkara Gregorio Saldanha 13/PID.B/1992/ PD.Dili, Transkrip persidangan, hal. 218.
128. CAVR, wawancara dengan Gregorio Saldanha, Dili, 4 Juni 2004, hal. 3.
129. Berkas Perkara Gregorio Saldanha 13/PID.B/1992/PD.Dili, Putusan, hal. 159.
130. Berkas Perkara Gregorio Saldanha, , Submisi-submisi pembelaan diringkas dalam Pro Kontra Memori Banding.
131. Luhut M.P. Pangaribuan, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR, tentang Penahanan Politik, Dili, 18 Februari 2003.
132. CAVR, wawancara dengan Jacinto Alves, Dili, 5 Mei 2004.
133. CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 1 Agustus 2004.

134. Berkas Perkara Gregorio Saldanha 13/PID.B/1992/ PD.Dili; jawaban penuntut umum pada eksepsi pembela, hal. 8.
135. Berkas Perkara Francisco Branco, 14/PID.B/1992/PD.Dili, pidato pembelaan, hal. 1.
136. Ibid., hal. 2.
137. CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 1 Agustus 2004, hal. 5.
138. CAVR, wawancara, Ibid.
139. Berkas Perkara Gregorio Saldanha No.13/PID.B/1992/PD.DIL; jawaban tertulis pembela untuk tuntutan jaksa.
140. Berkas Perkara Jacinto Das Neves Raimundo Alves, No. 15/PID/B/1992/PD.Dili; pidato pembelaan, hal. 9.
141. Ibid., hal. 28.
142. CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Dili, 1 Agustus 2004, hal. 4.
143. Berkas Perkara Gregorio Saldanha 13/PID.B/1992/PD.Dili; transkrip persidangan, hal. 9.
144. Berkas Perkara Jacinto Alves, No. 15/PID/B/1992/PN.DIL; Putusan Pengadilan Negeri Dili, hal. 235.
145. Ibid., hal. 218.
146. Amnesty International, *Indonesia/East Timor: In Accordance with the Law: Statement to the United Nations Special Committee on Decolonization*, Juli 1992, hal. 4.
147. Berkas Perkara Francisco Branco No.14/PID.B/1992/PD.DIL. Keputusan Pengadilan Dili, Hal 116.
148. Berkas perkara Gregorio Saldanha, 13/PID.B/1992/PD. Dili, Putusan, hal. 217.
149. Lihat misalnya Berkas Perkara Francisco Branco 14/PID.B/1992/PD.Dili, Putusan, hal. 155; Berkas Perkara Jacinto Alves, Putusan, hal. 236.
150. Dalam berkas pengadilan terdapat putusan-putusan banding dari Pengadilan Tinggi Kupang untuk Francisco Branco, Gregorio Saldanha, Jacinto Alves, Filomeno Fereira dan Juvencio Martins.
151. CAVR, wawancara dengan Francisco Branco, Gedung Parlemen, 1 Agustus 2004, hal. 6.
152. Pasal 14(5) ICCPR: Setiap orang yang diputus bersalah mempunyai hak terhadap putusan dan hukumannya ditinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi menurut hukum.
153. Berkas Perkara Gregorio Saldanha 13/PID/B/1992/PD.Dili, Putusan Pengadilan Tinggi, hal. 63.
154. Berkas Perkara Bonafacio Magno, No.97/PID/B/84/PN.DIL., Kasasi dan Putusan perihal Pengampunan.
155. Amnesty International, *Indonesia/East Timor: In Accordance with the Law: Statement to the United Nations Special Committee on Decolonization*, Juli 1992, hal. 2.
156. International Commission of Jurists, *Tragedy in East Timor*, Oktober 1992, hal. 15.
157. YLBHI, *Kasus Timor Timur: Laporan Penanganan Kasus*; Jakarta 1992.
158. Ibid.
159. Berkas-berkas Perkara Fernando Lasama de Araújo, Virgilio Da Silva Guterres, Agapito Cardoso, dan Domingos Barreto.
160. CAVR, wawancara dengan João Freitas da Câmara, Dili, 5 Juni 2004; Fernando "Lasama" de Araújo, Dili, 5 Mei 2004; Virgilio da Silva Guterres, Dili, 5 Mei 2004; Domingos de Jesus Barreto, Dili, 6 Mei 2004.
161. CAVR, wawancara dengan: Asmara Nababan, Jakarta Pusat, 8 Juni 2004; Luhut M.P. Pangaribuan, S H, LL M, Jakarta Pusat, 9 Juni 2004; Munir, S.H., Jakarta Pusat, 9 Juni 2004; Artidjo Alkostar, S H, LL M, Jakarta Pusat; Hendaridi, Jakarta Pusat, 10 Juni 2004.
162. CAVR, wawancara dengan Domingos de Jesus Barreto, Dili, 6 Mei 2004.
163. CAVR, wawancara dengan João Freitas da Camara, Dili, 5 Juni 2004.
164. Ibid.
165. YLBHI, *Kasus Timor Timur: Laporan Penanganan Kasus*; 1991, hal. 4.
166. LBH Surabaya, *Laporan Investigasi lapangan mengenai mahasiswa Timor Timur*, Denpasar 15-17 Desember 1991: hal. 2.
167. CAVR, wawancara dengan Fernando Lasama de Araújo, Jakarta 5 Mei 1992, hal. 4-5.
168. Fernando Lasama de Araújo, *Eksepsi*, Jakarta 23 Maret 1992, hal. 4-5.
169. YLBHI, *Kasus Timor Timur: Laporan Penanganan Kasus*, Jakarta 1991, hal. 6.
170. CAVR, wawancara dengan João Freitas da Camara, Dili, 5 Juni 2004.
171. CAVR, wawancara dengan Domingos de Jesus Barreto, Dili, 6 Mei 2004.

172. CAVR, wawancara dengan João da Camara, Dili, 5 Juni 2004.
173. CAVR, wawancara dengan Fernando de Araújo, Dili, 5 Mei 2004.
174. Fernando Lasama de Araújo, Pembelaan, hal. 7.
175. João Freitas da Camara, Duplik, dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Tengah, 13 Mei 1992, hal. 7.
176. João Freitas da Camara, "Rekaman Interogasi", 10 Desember 1991.
177. João Freitas da Camara, Duplik, 13 Maret 1992, hal. 8.
178. Fernando de Araújo, Tanggapan atas replik penuntut umum terhadap pembelaan kami dan pembelaan penasihat hukum kami, Jakarta 18 Mei 1992, hal. 9.
179. CAVR, wawancara dengan João Freitas da Camara, Dili, 5 Juni 2004.
180. CAVR, wawancara dengan Fernando de Araújo, Dili, 5 Mei 2004.
181. Ibid.
182. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Surat Dakwaan Perkara Subversi, Terdakwa João Feritas Da Câmara, Jakarta, 3 Maret 1992, hal. 23.
183. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Surat Dakwaan Perkara Subversi, Terdakwa Fernando de Araújo alias Lasama, Jakarta, 2 Maret 1992.
184. CAVR, wawancara dengan Fernando de Araújo, Dili, 5 Mei 2004.
185. CAVR, wawancara dengan João da Camara, Dili 5 Juni 2004.
186. Lihat Surat Tuduhan untuk para Tersangka.
187. Tuntutan pemidanaan (requisitor) terhadap terdakwa Virgilio da Silva Guterres, Jakarta 25 April 1992, hal. 36-37.
188. CAVR, wawancara dengan Fernando de Araújo, Dili, 5 Mei 2004.
189. CAVR, wawancara dengan João Freitas da Camara, Dili, 5 Juni 2004.
190. Pembelaan João Freitas da Camara, Jakarta 2 Mei 1992, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal.7, 25, dan 35.
191. Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan, 30 Juli 1992 Nomor: 01/SUBV/PID/1992/PT.DKI, untuk perkara João Freitas da Camara.
192. Ibid.
193. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor: The Trial of Xanana Gusmão and a Follow-up to the Dili Massacre", Vol. 5 No.8, April 1993, hal. 8.
194. Ibid.
195. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, hal. 3.
196. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 8
197. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, hal. 2.
198. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Ibid, hal. 3.
199. Ibid.
200. Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-49, Situation in East Timor: Report of the Secretary-General, 10 Februari 1993, hal. 14.
201. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 9.
202. Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-49.
203. Ibid.
204. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 9.
205. Ibid.
206. Ibid.
207. Ibid., hal. 8
208. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, 10 Agustus 2004; hal. 5.
209. Ibid., hal. 1-2.
210. Ibid., hal. 9.
211. Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, Jakarta Mei 1993, terbit dalam Peter Slezak (ed.), *A Travesty of Justice: Xanana Gusmão's Defence*; East Timor Relief Association, Sydney, 1996: hal. 15.
212. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.

213. Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam Slezak (ed.), hal. 13.
214. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, 10 Agustus 2004; hal. 4.
215. Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-50, "Situation in East Timor: Report of the Secretary-General", 20 Januari 1994; hal. 12.
216. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
217. Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice: Xanana Gusmão's Defence*, hal. 27.
218. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, hal. 5.
219. *Ibid.*, hal. 1.
220. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 8.
221. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, hal. 1.
222. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 8.
223. YLBHI, *The Attitude and Measure Taken by the Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) regarding Xanana Gusmão, Kay Rala*, 17 Januari 1994, hal. 2.
224. Surat Xanana Gusmão pada Komisi Ahli Hukum Internasional; Penjara Cipinang 1 Desember 1993; diterbitkan dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 31.
225. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 12.
226. *Ibid.*, hal. 13.
227. Surat Xanana Gusmão, dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 31.
228. Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam *ibid.*, hal. 23.
229. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 13.
230. *Ibid.*
231. Surat Xanana Gusmão pada ICJ; Penjara Cipinang, 1 Desember 1993; terbit dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 31.
232. *Ibid.*, hal. 32.
233. *Ibid.*
234. *Ibid.*
235. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 13.
236. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, hal. 6.
237. *Ibid.*
238. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 13.
239. *Ibid.*
240. *Ibid.*, hal. 30-35.
241. *Ibid.*, hal. 7.
242. *Ibid.*, hal. 11.
243. *Ibid.*, 12.
244. *Ibid.*, hal. 11.
245. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, hal. 7.
246. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 3.
247. *Ibid.*, hal. 5.
248. *Ibid.*, hal. 7.
249. *Ibid.*
250. *Ibid.*
251. *Ibid.*
252. *Ibid.*, hal. 20.
253. *Ibid.*
254. *Ibid.*
255. *Ibid.*
256. Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 13.
257. *Ibid.*, hal. 46.
258. *Ibid.*, hal. 45.
259. *Ibid.*, hal. 37.

260. Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Sidang ke-50, Situation in East Timor: Report of the Secretary-General, hal. 10.
261. Ibid.
262. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 16.
263. Ibid., hal. 27.
264. Ibid., hal. 17.
265. Ibid., hal. 16.
266. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, 10 Agustus 2004, hal. 9.
267. Ibid.
268. ICJ, Australian Section, "Report on the Trial of José Alexandre Gusmão" terbit ulang dalam Slezak (ed), *A Travesty of Justice*, hal. 43.
269. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 17.
270. Ibid.
271. Ibid., hal. 16.
272. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, 10 Agustus 2004, hal. 11.
273. ICJ, Australian Section, "Report on the Trial of José Alexandre Gusmão", dalam Slezak (ed), *A Travesty of Justice*, hal. 43.
274. Ibid.
275. Amnesty International, *State of Fear*, Statement before UN Special Committee on Decolonization, tak bertanggung, hal. 3.
276. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 18.
277. Amnesty International: *East Timor: Who is to Blame?*, Pernyataan di depan Komisi Khusus PBB untuk Dekolonisasi, Juli 1994, hal. 12.
278. Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam Slezak (ed), *A Travesty of Justice*, hal. 25.
279. "Penasihat Hukum Xanana Gusmão: Saksi *a de charge* (Saksi yang memberatkan) sulit!", *Suara Timor Timur*, 24 Februari 1993, hal. 27.
280. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 14.
281. Ibid.
282. Ibid.
283. Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam Slezak (ed), *A Travesty of Justice*, hal. 23.
284. Surat Xanana Gusmão kepada ICJ, 1 Desember 1993, cetak ulang dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 32.
285. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 15.
286. Amnesty International, *Unfair Political Trial of Xanana Gusmão*, Juli 1993, hal. 2.
287. *Asia Watch*, *Remembering History in East Timor*, hal. 15.
288. Ibid., hal. 14.
289. ICJ, "Report on the Trial of José Alexandre Gusmão", hal. 42.
290. Ibid., hal. 42.
291. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 15.
292. Ibid.
293. Ibid.
294. Surat Xanana Gusmão kepada ICJ, "Report on the Trial of José Alexandre Gusmão", hal. 34.
295. ICJ, "Report on the Trial of José Alexandre Gusmão", hal. 47.
296. Surat Xanana Gusmão kepada ICJ, 1 Desember 1993, hal. 32.
297. Ibid., hal. 33.
298. Ibid., hal. 47.
299. Ibid., hal. 7.
300. Ibid., hal. 33.
301. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
302. Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 33-34.
303. Mark Baker, "Lawyers condemn Gusmão decision", dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice: Xanana Gusmão's Defence*, Mei 1996, hal. 37.

304. "Carta a Comissao Internacional de Juristas" dalam Xanana Gusmão, *Timor Leste: Um Povo, Uma Patria*, hal. 320; Surat dari Xanana Gusmão kepada ICJ tanggal 1 Desember 1993 dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 36.
305. *Ibid.*, hal. 7.
306. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, hal. 8.
307. Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, hal. 14.
308. *Ibid.*, hal. 17
309. *Ibid.*, hal. 19.
310. *Ibid.*, hal. 20.
311. *Ibid.*, hal. 12.
312. *Ibid.*, hal. 28.
313. *Ibid.*, hal. 28.
314. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili 10 Agustus 2004.
315. Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan hal. 27.
316. *Ibid.*, hal. 29.
317. *Ibid.*
318. *Asia Watch*, "Remembering History in East Timor", hal. 18.
319. *Ibid.*, hal. 18.
320. Xanana Gusmão, Pidato Pembelaan, dalam Slezak (ed.), *A Travesty of Justice*, hal. 24.
321. *Ibid.*, hal. 26.
322. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004, hal. 9.
323. Surat Xanana Gusmão kepada ICJ, 1 Desember 1993, hal. 34.
324. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004
325. Amnesty Internasional, "Xanana Gusmão – A Briefing" [tanpa tanggal], hal. 4. Lebih lanjut, pada bulan Agustus 1997, pemerintah Indonesia memberi Xanana Gusmão remisi tiga bulan atas masa hukumannya.
326. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, hal. 10.
327. YLBHI, *The Attitude and Measures Taken by the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) regarding Xanana Gusmão, Kay Rala*, 17 Januari 1994, hal. 2.
328. D K Jana, "Media put words in Xanana Gusmão's Mouth", *Green Left Weekly* <http://www.greenleft.org.au>, hal. 1.
329. *Ibid.*
330. Indonesian Legal Aid Foundation, *The Attitude and Measures Taken by the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) regarding Xanana Gusmão, Kay Rala*, 17 Januari 1994, hal. 3.
331. Associated Press, 20 Februari 1994, dikutip dalam Amnesty International, *Xanana Gusmão – A Briefing*, hal. 3.
332. Editor 17, Februari 1994, dalam Amnesty International, *ibid.*, hal. 3.
333. Amnesty International, *Xanana Gusmão – A Briefing*, hal. 3.
334. Radio Australia, 24 Maret 1994, dalam *ibid.*, hal. 4.
335. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
336. D K Jana, "Media put words in Xanana Gusmão's Mouth", hal. 1.
337. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
338. Amnesty International, *Xanana Gusmão – A Briefing*, hal. 4.
339. *Ibid.*
340. CAVR, wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
341. Thomas A. Correia, *The Chronology of the Mahkota Hotel Tragedy, 23 March 1997*, submisi untuk CAVR 21 Mei 2004; wawancara CAVR dengan Thomas A. Correia, Dili, 29 Mei 2004.
342. CAVR, wawancara dengan Celina Pires da Costa, Dili, 12 Maret 2004.
343. CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
344. Thomas A. Correia, *The Chronology of the Mahkota Hotel Tragedy, 23 March 1997*; pernyataan HRVD 0555, 3761, 6963, 9189; BAP Olga Amaral dan Celina Pires da Costa, 24 Maret 1997, dalam Berkas Perkara Kepolisian dari Olga Amaral et al. No. LP/81/III/97/PMT.

345. CAVR, wawancara dengan: Thomas A Correia, Dili, 29 Mei 2004, Celina P. da Costa, Dili, 12 Mei 2004, BAP Olga Amaral dan Celina P. da Costa, 24 Maret 1997, keduanya dalam Berkas Perkara Kepolisian Olga Amaral et al.
346. CAVR, wawancara dengan Thomas A. Correia, Dili, 29 Mei 2004, dan dengan Celina Pires da Costa, Dili, 12 Maret, 2004; pernyataan HRVD 6963.
347. Pengadilan Negeri Dili, Putusan perkara Olga Amaral et al., 20 September 1997, Berkas Perkara No.70/PID.B/1997/PN.DIL; CAVR, wawancara dengan Thomas A. Correia, Dili, 29 Mei 2004; Pernyataan HRVD 6964.
348. Pernyataan HRVD 0106.
349. CAVR, wawancara dengan Celina P da Costa, Dili, 12 Mei 2004.
350. HRVD 3761.
351. Laporan penangkapan Olga Amaral, 23 Maret 1997, Berkas Perkara Olga Amaral et al. No. LP/81/III/97/PMT.
352. CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
353. Ibid.
354. Ibid.
355. Ibid.
356. CAVR, wawancara dengan Celina P.da Costa, Dili, 12 Mei 2004.
357. Pernyataan HRVD 6963.
358. Ibid.
359. CAVR, wawancara dengan Thomas A Correia, Dili, 29 Mei 2004.
360. Ibid.
361. CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
362. Ibid.
363. CAVR, wawancara dengan Thomas A. Correia, Dili, 29 Mei 2004; Pernyataan HRVD No. 0555; Pernyataan HRVD 6963.
364. CAVR, wawancara dengan Celina Pires da Costa, Dili, 12 Maret 2004.
365. CAVR, wawancara dengan Celina Pires da Costa, Dili, 29 Mei 2004.
366. Ibid.
367. BAP Olga Amaral dan Celina P.da Costa, 23 Maret 1997; kedua-duanya dalam Berkas Kepolisian No.LP/81/III/97/PMT.
368. CAVR, wawancara dengan Thomas A. Correia, 29 Mei 2004.
369. CAVR, wawancara dengan Celina P.da Costa, Dili, 12 Maret 2004.
370. CAVR, wawancara dengan Aniceto Guterres Lopes, Dili, 27 September 2004.
371. CAVR, wawancara dengan Thomas A. Correia, 29 Maret 2004.
372. CAVR, wawancara dengan Aniceto Guterres Lopes, 9 Juli 2004.
373. CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, 18 Mei 2004.
374. CAVR, wawancara dengan Celina Pires da Costa, Dili, 12 Mei 2004.
375. CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
376. CAVR, wawancara dengan Thomas A. Correia, Dili, 8 September 2004.
377. Ibid.
378. Turunan putusan pengadilan untuk perkara Olga Amaral et al., dikutip dari tuduhan Penuntut Umum 20 September 1997, hal. 12-13; berkas perkara No.70/PID.B/1997/PN.DIL.
379. Ibid.
380. Ibid.
381. Amnesty International, *East Timor: The Hotel Mahkota Demonstration Trial*, Juni 1997.
382. CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
383. BAP Saksi Suhaedar, 29 Maret 1997, hal. 1-2; dalam berkas kepolisian dari Olga Amaral et al., No. LP/81/III/97/PMT.
384. BAP Saksi Soliquin, 29 Maret 1997, hal. 2; dalam berkas perkara Olga Amaral et al., No. LP/81/III/97/PMT.
385. Polisi Distrik Dili, BAP Joanico da Costa, Johanes Dima, Muhamad Saleh, I Ketut Suteja, Subiyanto, Slamet, I Ketut Sudarma Wiasa, Deda Kuswandi, Ramlin, I Gede Redama, Joko Sucipto, A.Suradi, Suhaedar, Djoni Frans Lapaisaly, dan Soliquin; 24-29 Maret 1997, dalam berkas perkara Olga Amaral et al.

386. Pengadilan Negeri Dili, Putusan perkara Olga Amaral et al., 20 September 1997, hal. 16.
387. Wawancara kedua CAVR dengan Aniceto Guterres, 27 September 2004.
388. Pengadilan Negeri Dili, Putusan Kasus Olga Amaral et al., 20 September 1997, hal. 11; lihat juga berita penahanan 16 tersangka, semua 23 Maret 1997, dalam Berkas Perkara Kepolisian.
389. Putusan Pengadilan Negeri Dili dalam perkara Olga Amaral et al., hal. 22-23.
390. CAVR, wawancara dengan Aniceto Guterres Lopes, Dili, 9 Juli 2004.
391. CAVR, wawancara kedua dengan Aniceto Guterres Lopes, 27 September 2004.
392. Ibid.
393. Putusan Pengadilan Negeri Dili, untuk kasus Olga Amaral et.al, 20 September 1997, hal. 29.
394. CAVR, wawancara dengan Aniceto Guterres Lopes, Dili, 9 Juli 2004.
395. Putusan Pengadilan Negeri Dili, untuk kasus Olga Amaral et al., hal 30-31.
396. CAVR, wawancara dengan Rui Perreira, Dili, 5 Juli 2004.
397. CAVR, wawancara dengan Aniceto Guterres Lopes, Dili, 27 September 2004.
398. CAVR, wawancara kedua dengan Aniceto Guterres Lopes, Dili, 27 September 2004.
399. Ibid.
400. CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.
401. Putusan pengadilan 16 terdakwa, turunan; 20 September 1997, hal. 32; Amnesty International, *East Timor: Fear of Torture/III-Treatment/Possible Prisoners of Conscience*, 24 Maret 1997.
402. Putusan pengadilan, turunan; dikutip dari tuduhan penuntut umum, 20 September 1997, hal. 32-33.
403. Ibid.
404. Wawancara CAVR dengan Thomas A. Correia, Dili, 29 Mei 2004; turunan putusan pengadilan: Olga Amaral, Celina hal. da Costa, José Gabriel, Constantino G. Leite, José Sarmiento Boavida, Mateus da Costa Inacio, Bendito Amaral, Crispin da Silva, Augusto Raimundo Matos, Domingos Sarmiento, Rafael de Almeida, Abel Ximenes, Zito Borges, Aleixo da Silva Ximenes, Anacleto da Silva, 20 September 1997; Berkas Perkara No. 70/PID.B/1997/PIN.DIL, hal. 2 dan 37: nama-nama terduduk dan satu tahun penjara untuk masing-masing terduduk.
405. Amnesty International, *East Timor: The Hotel Mahkota Demonstration Trials*, Juni 1997.
406. CAVR, wawancara dengan Thomas A. Correia, Dili, 29 Mei 2004; Celina P. da Costa, 12 Maret 2004; Akta Penolakan Banding; Dokumen No. 70/Akta Pid/1997/PN.DIL, 20 September 1997, dalam Berkas Perkara No. 70/PID.B/1997/PIN.DIL.
407. CAVR, wawancara dengan Vasco da Gama, Dili, 18 Mei 2004.



Chega!

Bagian 7
Bab 7.7.

Pemeriksaan, perbudakan seksual,
dan bentuk-bentuk lain kekerasan
seksual

Bagian 7

Bab 7.7. **Pemeriksaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual**

..... 2121 | Pengantar

2125 | Definisi dan metodologi

2127 | Budaya bisu

..... 2128 | Pemeriksaan

2130 | Pemeriksaan dalam konteks konflik antar partai (1975)

2131 | Pemeriksaan oleh anggota partai UDT

2131 | Pemeriksaan oleh anggota Fretilin dan Falintil

2132 | Pemeriksaan selama masa pendudukan Indonesia (1975-1999)

2133 | Pemeriksaan oleh anggota Falintil

2135 | Pemeriksaan oleh anggota angkatan bersenjata Indonesia dan pasukan pembantunya: masa invasi dan operasi-operasi besar (1975-1984)

2135 | **A. Pemeriksaan pada saat menyerah (1975-1979)**

2137 | **B. Pemeriksaan berkelompok sebagai bagian dari penyerangan militer**

2138 | **C. Pemeriksaan di instalasi militer**

2139 | **Boks: Pemeriksaan di Komando Rayon Militer (Koramil) Uatolari 1979-1981**

2143 | **Boks: Pemeriksaan terhadap tahanan laki-laki**

2146 | **Boks: Pemeriksaan terhadap tahanan perempuan di Hotel Flamboyant**

2150 | **D. Pemeriksaan lain**

2153 | Pemeriksaan di masa konsolidasi pendudukan (1985-1998)

2153 | **A. Pemeriksaan dalam tahanan**

2156 | **B. Pemeriksaan tanpa proses hukum**

2159 | **C. Pemeriksaan di dalam dan di sekitar rumah korban**

2162 | **Boks: Kesaksian dan bukti dari Mário Viegas Carrascalão tentang kekerasan terhadap perempuan dari 1982 sampai dengan 1992**

2164 | Pemeriksaan dan Jajak Pendapat

2165 | **A. Pemeriksaan sebelum Jajak Pendapat (April-Agustus 1999)**

2170 | **B. Pemeriksaan setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat (September-Oktober 1999)**

2173 | Boks: *Pemeriksaan dan pembunuhan ZE, 11 September 1999*

2176 | Boks: *Pemeriksaan dan perbudakan seksual sesudah pembantaian di Gereja Suai, 6 September 1999*

2184 | Perbudakan seksual

2186 | Perspektif korban

2187 | Perbudakan seksual dalam konteks konflik antarpantai

2188 | Perbudakan seksual selama masa pendudukan Indonesia (1975-1999)

2189 | Perbudakan seksual pada masa invasi dan operasi-operasi skala besar (1975-1984)

2189 | **A. Perbudakan seksual militer di instalasi militer**

2193 | **B. Perbudakan seksual oleh militer di luar instalasi militer**

2194 | **C. Perbudakan seksual dalam rumahtangga**

2198 | **D. Perbudakan seksual dalam rumahtangga yang beruntun**

2201 | **E. Studi kasus: pemeriksaan dan perbudakan seksual di Mau Chiga, Ainaro**

2203 | *E.1. Penahanan di Dare, Ainaro*

2210 | *E.2. Penahanan di Pulau Atauro, Dili*

2212 | *E.3 Penahanan di Dotik (Alas, Manufahi)*

2213 | Boks: *Kesaksian XH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro*

2216 | Perbudakan seksual pada masa konsolidasi pendudukan (1985-1998)

2217 | Boks: *Kesaksian MI, Lalerek Mutin, Viqueque*

2221 | Perbudakan seksual oleh anggota Falintil

2221 | Perbudakan seksual dan Jajak Pendapat (1999)

2223 | Boks: *Pemeriksaan dan perbudakan seksual oleh Milisi Halilintar di Atabae, Bobonaro*

2229 | Bentuk-bentuk lain kekerasan seksual

2230 | Bentuk-bentuk lain kekerasan seksual dalam konteks konflik antarpantai

2230 | Bentuk-bentuk lain kekerasan seksual selama pendudukan Indonesia (1975-1999)

2230 | Penyiksaan dan penghinaan seksual dalam penahanan

2237 | Boks: *Kesaksian DK, Mehara, Tutuala*

2240 | Mengambil foto para tahanan

2243 | Penghinaan seksual di depan umum

2246 | Pelecehan seksual

..... **2249** | Dampak kekerasan seksual terhadap korban

2250 | Kesehatan reproduksi

2252 | Aborsi yang tidak aman

2253 | Kesehatan mental

2254 | Lingkaran pengorbanan

2255 | Menyalahkan diri sendiri

2255 | Mempersalahkan korban

2258 | Kehilangan keperawanan, kehilangan kesempatan untuk menikah

2258 | Bertahan hidup dan diskriminasi terhadap anak-anak

2261 | Berpisah atau rujuk

..... **2263** | Temuan

2263 | Kekerasan seksual oleh anggota Fretelin dan UDT

2263 | Kekerasan seksual oleh anggota Falintil

2263 | Pemerkosaan dan penyiksaan seksual oleh anggota pasukan keamanan Indonesia

2267 | Impunitas bagi pelaku pemerkosaan dan penyiksaan seksual

2268 | Perbudakan seksual

2269 | Impunitas bagi pelaku perbudakan seksual

2270 | Pelanggaran seksual sebagai alat teror dan degradasi

2270 | Jumlah seluruh korban kekerasan seksual

2271 | Dampak terhadap korban

Daftar tabel:

- 2196** | **Tabel 1** : Ringkasan kasus perbudakan seksual dalam rumahtangga (1975-1984)
2208 | **Tabel 2** : Tahanan Perempuan di Gedung Sekolah Dasar, Dare, Atauro, 1982-1983

Daftar grafik:

- 2122** | **Grafik 1** : Jumlah pelanggaran berbasis seksual yang dilaporkan, 1974-1999
2123 | **Grafik 2** : Jumlah pelanggaran seksual yang dilaporkan, berdasarkan distrik
2129 | **Grafik 3** : Jumlah pemerkosaan yang dilaporkan, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999
2130 | **Grafik 4** : Pelanggaran dalam lintas waktu, 1974-1999
2133 | **Grafik 5** : Jumlah pemerkosaan berdasarkan pelaku, 1974-1999
2164 | **Grafik 6** : Jumlah pemerkosaan berdasarkan pelaku, 1999
2170 | **Grafik 7** : Jumlah pemerkosaan berdasarkan pelaku, 1999
2185 | **Grafik 8** : Pelanggaran dalam lintas waktu, 1974-1999
2186 | **Grafik 9** : Jumlah perbudakan seksual berdasarkan pelaku, 1974-1999

Pemeriksaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual

Pengantar

1. Sesuai mandatnya yang tertera dalam Pasal 3.4c, Komisi diharuskan mengembangkan pendekatan yang peka gender dalam proses pencarian kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik politik dari 25 April 1974 hingga 25 Oktober 1999. Laki-laki dan perempuan memiliki peran dan status sosial yang berbeda dalam masyarakat mereka, dan Komisi diharuskan memahami bagaimana hal ini berpengaruh pada pengalaman mereka mengenai pelanggaran dan dampak pelanggaran ini terhadap mereka. Walaupun perempuan juga mengalami pelanggaran-pelanggaran yang sama dengan laki-laki, hampir semua kasus kekerasan seksual—pemeriksaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual—dilakukan terhadap korban perempuan.
2. Komisi menemukan bahwa perempuan menjadi korban bentuk-bentuk pelanggaran yang spesifik, yang terkait dengan status rendah mereka dan stereotipe seksual yang dilekatkan pada mereka. Pelanggaran-pelanggaran ini, yang meliputi pemeriksaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, dan pelecehan seksual, dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual. Walaupun sebagian laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, misalnya orang-orang yang mengalami penyiksaan seksual dalam tahanan, mayoritas korban adalah perempuan.
3. Di Timor-Leste, seperti halnya di negeri-negeri lain, korban kekerasan seksual sering tidak mau berbicara tentang pengalamannya. Walaupun ada sebab-sebab budaya dan pribadi untuk sikap tersebut, Komisi telah menerima ratusan kesaksian langsung dari korban yang telah mengalami pelanggaran seksual berat yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia selama masa yang menjadi mandat Komisi. Juga telah diterima kesaksian-kesaksian dari korban tentang pelanggaran seksual yang dilakukan oleh anggota-anggota União Democrática Timorense (UDT), Associação Popular Democrática Timorense (Apodeti), Frente Revolucionário de Timor-Leste Independente (Fretilin), dan Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste (Falintil).

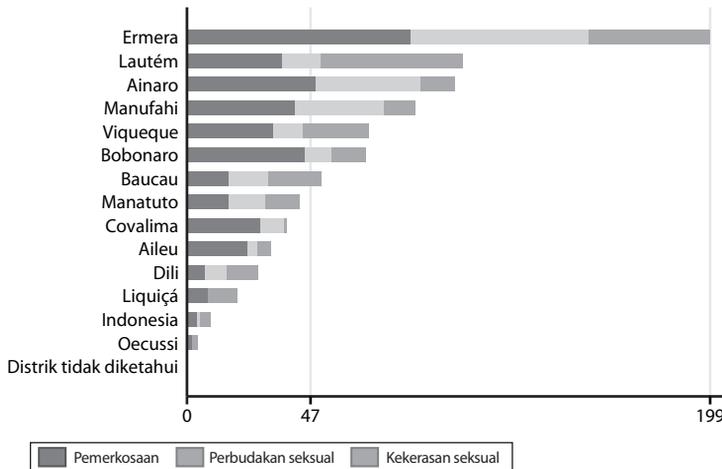
4. Kesaksian-kesaksian pribadi ini didukung oleh kumpulan bukti yang lebih besar yang memberikan kepada Komisi gambaran yang jelas dan konsisten tentang sifat pelanggaran seksual yang telah terjadi selama periode konflik politik. Bab ini berusaha menyampaikan kisah tentang pelanggaran-pelanggaran ini, dan konteks terjadinya pelanggaran-pelanggaran ini, kebanyakan melalui suara yang paling otentik, yaitu suara para korban sendiri.
5. Kebanyakan korban masih muda ketika mengalami pelanggaran. Mereka sudah berusia setengah baya pada saat memberikan kesaksian kepada Komisi. Banyak yang mengatakan bahwa mereka telah menyimpan ingatan tentang pelanggaran tersebut dalam kebisuan selama bertahun-tahun. Proses mengungkapkan bukti berupa kesaksian mereka ini kepada Komisi sering melibatkan proses emosional yang berat untuk para korban dan petugas Komisi yang mewawancarai mereka.
6. Para perempuan yang menceritakan pengalaman mereka kepada Komisi berasal dari berbagai daerah dan berbagai komunitas, tetapi perincian kesaksian yang mereka paparkan sangat serupa. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyesatkan Komisi. Kenyataan bahwa mereka datang dari kelompok yang begitu berbeda-beda memustahilkan bentuk persekongkolan apapun.
7. Dari proses pengambilan pernyataan, Komisi mendokumentasikan 853 pelanggaran seksual yang dilaporkan. Pemerkosaan adalah pelanggaran seksual yang paling banyak dilaporkan: 46,1% (393 dari 853) dari semua pelanggaran seksual yang didokumentasikan oleh Komisi. Ini disusul oleh pelecehan seksual dan tindakan kekerasan seksual lainnya (27,1% [231/853]) serta perbudakan seksual (26,8% [229/853]) dari semua tindak kekerasan seksual yang dilaporkan. Dari seluruh pelanggaran yang didokumentasikan dari proses pengambilan pernyataan, 93,3% (796/853) terkait dengan pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pendukung mereka, 2,5% dengan Fretilin (21/853), 1,2% dengan Falintil (10/853), 0,6% dengan pasukan UDT (5/853), 0,1% dengan Apodeti (1/853), dan 0,9% dengan yang lain (8/853).

Jumlah pelanggaran berbasis seksual yang dilaporkan, 1974 – 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah pelanggaran seksual yang dilaporkan, berdasarkan distrik



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

8. Komisi juga mewawancarai lebih daripada 200 korban dan saksi kekerasan seksual. Wawancara dan pernyataan mendalam mengenai kejadian-kejadian kekerasan seksual ini mengungkapkan suatu gambaran besar tentang impunitas dalam kasus-kasus pelanggaran seksual. Setelah memeriksa dengan seksama bukti yang diperoleh, Komisi tidak memiliki keraguan bahwa pola pelanggaran seksual yang meluas sebagaimana disampaikan oleh perempuan-perempuan tersebut adalah kebenaran.

9. Dilihat dengan standar apapun, isi bab ini memaparkan suatu kisah yang memalukan dan mengerikan tentang penyalahgunaan kekuasaan. Menjadi jelas bahwa anggota masyarakat yang secara fisik paling lemah dan rentan telah dijadikan sasaran untuk alasan-alasan yang samasekali tak punya hubungan sah dengan tujuan militer maupun politik.

10. Suara-suara korban dalam bab ini memberikan gambaran yang jelas tentang sifat meluas dan sistematis keterlibatan terbuka anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia dalam tindakan pemerkosaan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual selama seluruh masa invasi dan pendudukan. Anggota-anggota Fretilin, UDT, dan Falintil juga melakukan pelanggaran seksual, namun ini merupakan kejadian-kejadian yang terisolasi dan dalam skala yang jauh lebih kecil. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak bersifat meluas ataupun sistematis.

11. Bukti juga menunjukkan bagaimana penerimaan praktik tercela ini oleh para komandan dan pejabat mendorong orang-orang di bawah komando dan kendali mereka untuk melanjutkan dan memperluas praktik-praktik tersebut. Kesaksian korban jelas menunjukkan bahwa praktik pemerkosaan dan penyiksaan seksual

lainnya oleh anggota pasukan keamanan pada saat menjalankan tugas resmi, di instalasi militer dan bangunan resmi lainnya, telah menjadi kebiasaan yang diterima secara luas. Praktik-praktik ini mendapatkan impunitas yang nyaris menyeluruh.

12. Tindakan-tindakan yang umum dan terjadi secara terbuka di tempat-tempat resmi tersebut termasuk penyiksaan seksual terhadap perempuan secara berkepanjangan, diikuti dengan pemerkosaan secara individual maupun berkelompok oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia. Penyiksaan seksual ini sering mencakup pemotongan organ seksual perempuan, memasukkan benda ke dalam alat kelamin, pembakaran payudara dan alat kelamin dengan rokok, penyetruman alat kelamin, payudara, dan mulut, pemaksaan tahanan untuk saling berhubungan seks, pemerkosaan terhadap perempuan hamil, pemerkosaan terhadap perempuan yang matanya ditutup dan tangan-kakinya dibelenggu, dan penggunaan ular untuk meneror korban.

13. Kesaksian korban juga menunjukkan bahwa perempuan sering mengalami pemerkosaan pada saat operasi militer berlangsung dan bahwa merupakan praktik umum bagi para perwira militer untuk memaksa perempuan muda, melalui ancaman kekerasan langsung terhadap diri mereka, keluarga, serta komunitas mereka, untuk hidup dalam kondisi perbudakan seksual. Dalam situasi seperti ini, yang sering berlangsung bertahun-tahun, para perwira memerkosa perempuan dalam kekuasaannya semau mereka, dari hari ke hari. Dalam sejumlah kasus, perempuan “dialihkan” oleh para perwira tersebut kepada perwira yang menggantikan mereka atau kepada perwira lain. Semua ini tidak saja ditoleransi oleh para perwira dan pejabat senior, tapi bahkan dianjurkan. Para komandan serta pejabat juga terlibat.

14. Walaupun ada tabu budaya dan hambatan pribadi yang berat, sejumlah perempuan memberikan kesaksian yang terperinci tentang penderitaan mereka pada audiensi publik, yang disiarkan langsung oleh radio dan televisi nasional. Komisi menghargai keberanian yang luar biasa dari para perempuan ini dan semua korban yang memberikan kesaksian serta bersedia diwawancarai. Komisi menghargai tekad kuat untuk mengungkapkan kisah-kisah tentang penderitaan mereka itu, dengan pengorbanan pribadi apapun. Komisi juga menarik kesimpulan yang tak bisa dielakkan bahwa ratusan perempuan yang memberikan kesaksian langsung itu hanyalah sebagian kecil dari seluruh korban yang tidak memberikan kesaksian karena terhambat oleh tekanan sosial maupun pribadi atau karena ketidakmampuan berbicara mengenai pengalaman mereka akibat trauma berkelanjutan yang terkait dengan pelanggaran.

15. Karena luasnya kejadian pemerkosaan sebagai satu bentuk pelanggaran seksual dalam periode 1974-1999, bagian pertama dari bab ini secara khusus membahas kesaksian-kesaksian yang berkaitan dengan kejahatan ini. Namun penting juga dipahami bahwa ada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mencakup pemerkosaan serta bentuk-bentuk lain eksploitasi dan kekerasan, di mana korbannya dipaksa masuk dalam suatu hubungan jangka panjang dengan pelaku. Untuk memahami bentuk kekerasan ini, bagian kedua dari bab ini membahas bentuk-bentuk perbudakan seksual. Ini diikuti dengan pembahasan tentang bentuk-bentuk lain

kekerasan seksual yang mungkin saja terjadi secara terpisah atau bersamaan dengan pemerkosaan dan perbudakan seksual. Bab ini kemudian mengkaji dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap para korban dan ditutup dengan rangkuman mengenai temuan-temuan Komisi mengenai kekerasan seksual.

Definisi dan metodologi

16. Komisi menggunakan satu definisi kerja tentang kekerasan seksual sebagai “segala kekerasan, baik fisik maupun psikologis, yang dilakukan dengan cara-cara seksual atau dengan menargetkan seksualitas.”¹ Definisi kekerasan seksual ini mencakup pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual seperti penyiksaan seksual, penghinaan seksual di depan umum, dan pelecehan seksual.

17. Pemerkosaan dan penyerangan seksual lainnya yang berat yang terjadi selama 25 tahun dalam mandat CAVR telah melanggar hukum internasional dan hukum dalam negeri yang berlaku pada saat terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut.

18. Tindakan-tindakan ini dilarang oleh ketentuan hukum dalam negeri dua rezim yang berkuasa di Timor-Leste antara tahun 1974 dan 1999. Hukum Pidana Portugal dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melarang tindakan pemerkosaan. KUHP juga mempidanakan tindakan membuat seseorang “membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pemerkosaan atau penganiayaan seksual berat lainnya dilarang oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum hak asasi manusia internasional yang melindungi hak fundamental setiap orang atas integritas fisik dan atas perlindungan terhadap penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak berperikemanusiaan, atau merendahkan martabat.

19. Dalam konflik bersenjata, perlindungan dari pemerkosaan dan kekerasan seksual diatur dengan lebih teliti. Hukum Internasional mengenai Konflik Bersenjata secara spesifik melarang pemerkosaan, dan berisi larangan-larangan umum terhadap penganiayaan, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai ‘kehormatan.’ Kekerasan seksual yang cukup berat, seperti pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual, dapat dimasukkan sebagai kejahatan terhadap umat manusia jika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.

20. Komisi mengembangkan sejumlah metode untuk mengatasi hambatan budaya yang membuat perempuan sulit berbicara secara terbuka mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami. Metode-metode ini termasuk keseimbangan gender dalam perekrutan staf pengambilan pernyataan dan staf dukungan korban untuk

.....
* Lihat Pasal 46 Peraturan Tambahan Konvensi Den Haag IV untuk melindungi “hak dan kehormatan keluarga”. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap martabat pribadi berdasarkan Pasal Bersama 3 Konvensi Jenewa. Juga lihat Putusan Pengadilan Furundzija, paragraf 137 yang menelusuri evolusi hukum internasional untuk memasukkan larangan pemerkosaan dan penyerangan seksual berat dalam konflik bersenjata dengan rujukan pada Mahkamah Militer Internasional Tokyo dan larangan “kekejaman terhadap martabat pribadi” sebagaimana disebutkan dalam hukum kebiasaan internasional.

setiap tim distrik; keterlibatan perempuan dalam diskusi kelompok di desa-desa mengenai pengalaman pelanggaran hak asasi manusia secara kolektif; pelaksanaan program penelitian khusus selama enam bulan bekerja sama dengan satu organisasi non-pemerintah (Ornop) perempuan Timor-Leste mengenai pelanggaran hak asasi manusia perempuan; sebuah audiensi publik mengenai perempuan dan konflik, yang melibatkan kesaksian dan submisi dari Ornop perempuan; pelibatan korban perempuan untuk bersaksi dalam audiensi publik mengenai tema-tema lain sebagai sarana bagi korban untuk merehabilitasi martabatnya; satu survei rumah tangga yang mencakup wawancara terpisah dengan perempuan dewasa untuk menanyakan pengalaman mereka tentang pelanggaran hak asasi manusia; dan lokakarya-lokakarya pemulihan yang diselenggarakan dalam kelompok-kelompok kecil, yang mencakup satu lokakarya hanya untuk perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual, dengan bantuan dari satu Ornop perempuan Timor-Leste.

21. Dari total 7.668 pernyataan yang dikumpulkan Komisi, 1.642 diambil dari para perempuan yang pernah menjadi saksi atau korban dari pelanggaran hak asasi manusia. Ini merupakan 21,4% dari seluruh pernyataan yang dikumpulkan selama 18 bulan operasi. Selain itu, 260 pernyataan tentang pelanggaran yang dilaporkan oleh perempuan diterima sebagai submisi dari satu Ornop perempuan. Secara keseluruhan, 3.482 laki-laki dan 1.384 perempuan terlibat dalam diskusi-diskusi partisipatoris di tingkat desa yang diselenggarakan di 284 desa di lebih daripada 60 subdistrik. Pertemuan-pertemuan khusus untuk perempuan diselenggarakan di 22 desa. Tim peneliti Komisi melakukan lebih daripada 200 wawancara, yang sebagian besar adalah dengan para perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia.

22. Audiensi Publik Nasional tentang Perempuan dan Konflik yang diselenggarakan Komisi pada 28-29 April 2003 memberikan kesempatan kepada empat belas perempuan untuk memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka. Dalam audiensi ini, empat saksi ahli juga memberikan informasi latar mengenai pelanggaran-pelanggaran ini. Secara keseluruhan, ada 18 perempuan yang memberi kesaksian dalam berbagai audiensi publik dengan tema-tema lain. Dalam survei angka kematian dan pelanggaran hak asasi manusia yang meliputi 1.332 rumah tangga yang dipilih secara acak, Komisi mewawancarai sedikitnya satu orang perempuan dewasa dari setiap keluarga mengenai pengalaman pelanggaran hak asasi manusia, termasuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelanggaran seksual. Secara keseluruhan, 1.718 perempuan diwawancarai sebagai bagian dari survei ini.^{*}

23. Bab ini lebih mengutamakan kasus-kasus yang sebelumnya tidak diketahui ketimbang kasus-kasus yang sudah dikenal. Walaupun sebagian besar kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak (berusia 17 tahun ke bawah) dibahas dalam bab mengenai anak, beberapa kasus juga dimasukkan di sini.

^{*} Semua sumber ini digunakan untuk pembahasan mengenai temuan-temuan dalam bab ini. Walaupun demikian, analisis statistik dalam bab ini, termasuk grafik-grafik, hanya memasukkan 1.642 pernyataan resmi dan tidak memasukkan data dari profil komunitas, survei kematian, atau wawancara mendalam yang dilakukan oleh tim peneliti.

Budaya bisu

24. “Ini rahasia antara saya dan Tuhan. Tidak usah digali lebih dalam.”² Inilah ungkapan dari seorang perempuan yang ditahan dan disiksa di Hotel Flamboyan, Baucau, ketika ditanya apakah dirinya mengalami pemerkosaan.

25. Banyak perempuan Timor-Leste sulit mengungkapkan bahwa mereka pernah menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Dalam kebudayaan yang sangat menghargai keperawanan perempuan, perempuan yang mengalami kekerasan seksual, pemerkosaan, dan perbudakan seksual khususnya, sangat rentan terhadap diskriminasi dan pengucilan. Masyarakat cenderung menyalahkan perempuan untuk kekerasan seksual yang mereka alami, memandang mereka seperti “barang bekas” dan menstigmatisasi anak-anak mereka. Bagi para perempuan korban kekerasan seksual, hampir tidak ada kompensasi sosial yang cukup untuk mendorong mereka mengungkapkan pengalaman mereka kepada orang lain.

26. Beberapa perempuan berbicara kepada Komisi mengenai kesulitan mereka mengakui kepada suami pengalaman pemerkosaan yang mereka alami karena takut terjadi penolakan. Seorang istri mungkin akan ditinggalkan oleh suaminya jika dia mengaku telah diperkosa. Seorang gadis mungkin tidak akan menemukan laki-laki yang bersedia menikahinya. Seorang perempuan yang diperkosa oleh militer bisa menjadi “sasaran wajar” untuk pelanggaran seksual oleh laki-laki lain.

27. Banyak kisah dalam bab ini mengungkapkan rasa malu dan hina yang dialami oleh perempuan-perempuan ini ketika mereka sudah dikenal sebagai “istri militer” atau *feto nona* (pelacur).^{*} Dalam sejumlah kasus, bahkan anak-anak yang lahir akibat pemerkosaan dan perbudakan seksual, dan kemudian ditelantarkan oleh ayah mereka, dikucilkan oleh lingkungannya.

28. Para pelaku memanfaatkan stigma pemerkosaan, bahkan mengandalkan rasa malu korban untuk menutupi identitas mereka sebagai pelaku. Bahkan dalam kasus-kasus di mana korban memiliki keberanian berbicara, biasanya tidak ada hukuman bagi para pelaku. Faktor-faktor ini semakin memperkuat budaya bisu.

29. Komisi menyadari bahwa kasus-kasus kekerasan seksual dan bukan seksual yang dialami oleh perempuan banyak yang tidak dilaporkan. Karena stigma sosial dan budaya yang melekat pada kekerasan seksual, individu, anggota keluarga, dan anggota masyarakat sering enggan berbicara mengenai hal tersebut di forum publik.[†]

^{*} *Feto nona* adalah istilah gabungan yang dihaluskan yang khas Timor-Leste: *feto* adalah kata bahasa Tetum yang berarti perempuan dan *nona* adalah kata bahasa Indonesia yang berarti perempuan muda yang belum menikah. Bagi seorang perempuan Timor-Leste menjadi seorang “nona” Indonesia menunjukkan identitas dari pelakunya.

[†] Untuk informasi yang lebih terperinci mengenai persoalan rendahnya laporan, lihat Bagian 6: Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

30. Komisi juga mengakui keberanian luar biasa yang telah ditunjukkan oleh para perempuan yang secara sukarela mengisahkan pengalaman mereka tentang kekerasan seksual dengan memberikan pernyataan dan bersaksi dalam berbagai audiensi publik.*

Pemeriksaan

31. Sesuai dengan hukum internasional, CAVR menggunakan definisi pemeriksaan sebagai suatu penyerangan fisik yang bersifat seksual, yang dilakukan terhadap seseorang dalam situasi yang bersifat memaksa mereka.³ Unsur-unsur pemeriksaan menurut definisi ini adalah sebagai berikut:

Penetrasi seksual, sesedikit apapun: (a) pada vagina atau anus korban dengan penis pelaku atau benda lain yang digunakan oleh pelaku; atau (b) pada mulut korban dengan penis pelaku; dengan pemaksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban atau orang ketiga.⁴

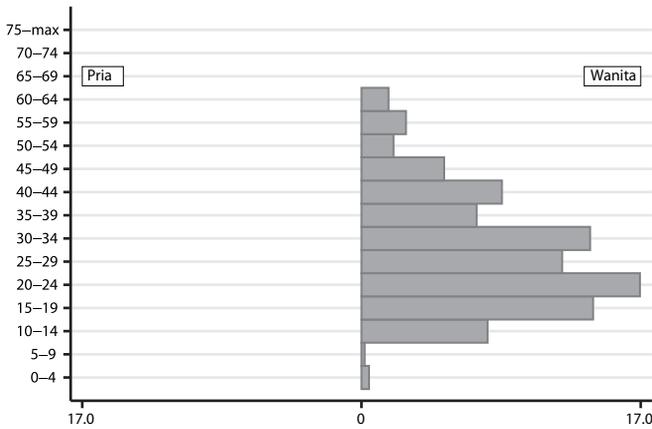
32. Pemeriksaan terjadi ketika penetrasi seksual terjadi tanpa persetujuan korban. Persetujuan harus diberikan secara sukarela, berdasarkan keinginan bebas korban, dan dinilai dalam konteks situasi lingkungan di mana tindakan ini terjadi.⁵ Dalam situasi di mana pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, atau penangkapan, menurut hukum internasional, seorang korban tidak dapat memberikan persetujuan. Keadaan yang memaksa yang ada dalam segala situasi konflik bersenjata menciptakan praduga tanpa persetujuan.[†]

33. Definisi di atas mengenai pemeriksaan berlaku untuk korban laki-laki dan perempuan. Namun, Komisi hanya menerima tiga laporan pemeriksaan terhadap laki-laki. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik berikut, mayoritas korban adalah perempuan, terutama mereka yang berumur 15-24 tahun.

* Komisi telah membuat inisial samaran untuk melindungi identitas korban kekerasan seksual dan orang-orang yang dekat dengan mereka yang disebutkan dalam kesaksian.

† Dalam hal ini, Komisi menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Pembuktian Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY), Peraturan 96.

Jumlah pemerkosaan yang dilaporkan, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 – 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
 Catatan: 34,9% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

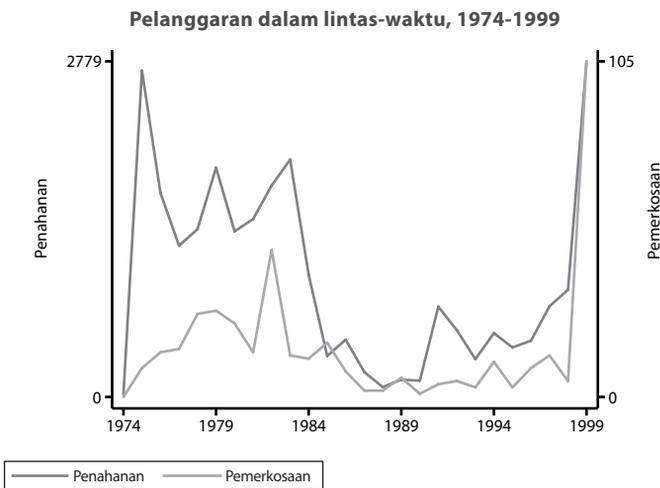
34. Data yang dikumpulkan melalui pernyataan, wawancara, dan submisi mengungkap pola yang jelas pemerkosaan yang konsisten dan meluas. Pemerkosaan terjadi setiap tahun pada masa pendudukan Indonesia (1975-1999) di semua tiga belas distrik. Komisi juga menerima laporan-laporan tentang pemerkosaan terhadap perempuan Timor-Leste yang terjadi di Timor Barat. Distrik-distrik dengan angka pemerkosaan yang tinggi juga cenderung mempunyai angka perbudakan seksual dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual yang relatif tinggi.

35. Seperti penyiksaan, pemerkosaan juga merupakan pelanggaran terhadap martabat pribadi yang digunakan untuk mengintimidasi, menghina, memermalukan, mendiskriminasi, menghukum, atau menguasai korban. Dalam keadaan-keadaan tertentu pemerkosaan menjadi sama dengan penyiksaan, misalnya ketika pemerkosaan digunakan untuk memperoleh informasi atau untuk mendapatkan pengakuan dari korban. Sebuah strategi lain adalah dengan menanamkan rasa takut kepada tahanan lain yang menyaksikan atau mendengar korban yang sedang disiksa. Ini menegaskan dan memperkuat posisi kuasa pelaku dan ketidakberdayaan korban.

36. Data yang dikumpulkan oleh CAVR menunjukkan bahwa ada satu pola yang konsisten dalam penyiksaan dan pemerkosaan terhadap para perempuan yang berada dalam penahanan selama periode konflik. Jumlah perempuan yang ditahan sewenang-wenang berbeda dari waktu ke waktu, tetapi praktik penyiksaan terhadap mereka yang ditahan tetap konsisten. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa penyiksaan terhadap tahanan perempuan tidak terjadi secara acak.

37. Pemerkosaan juga merupakan sebuah bentuk kekerasan pengganti atau perwakilan (*proxy violence*). Dengan kata lain, korban pemerkosaan adalah pengganti ketika sasaran utama kekerasan tidak bisa ditangkap. Dalam banyak kasus, para anggota militer memerkosa istri dari seorang tokoh pro-kemerdekaan yang tidak bisa mereka tahan. Komisi menerima bukti-bukti kekerasan pengganti yang serupa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik antarpantai, walaupun dalam skala yang lebih kecil daripada yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia.

38. Grafik di bawah ini membandingkan kasus-kasus penahanan sewenang-wenang dan pemerkosaan, yang menunjukkan bahwa kedua pelanggaran ini juga memiliki kecenderungan meningkat dan menurun seiring dengan berjalannya waktu.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

39. Untuk kepentingan analisis, bagian ini menjabarkan kasus-kasus pemerkosaan tunggal dan berganda, termasuk pemerkosaan beruntun dalam penahanan, yang pelakunya tidak menciptakan suatu kondisi kepemilikan.

Pemukosaan dalam konteks konflik antarpantai (1975)

40. Komisi menerima tujuh pernyataan mengenai pemerkosaan dalam konteks konflik antarpantai pada 1975, yang dilakukan oleh anggota-anggota bersenjata dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Komisi menyadari bahwa hasil ini mungkin mencerminkan kenyataan bahwa pemerkosaan memang tidak terjadi dalam jumlah yang besar selama periode ini. Akan tetapi, kecilnya angka kejadian yang dilaporkan dapat juga disebabkan oleh keengganan korban untuk menceritakan perkosaan yang dialaminya dan juga faktor-faktor lain, seperti rentang waktu yang lama sejak

konflik itu terjadi, kemungkinan bahwa saksi dan korban sudah meninggal, atau keengganan untuk mengungkapkan kejadian yang mungkin melibatkan orang-orang atau partai-partai politik yang masih ada di Timor-Leste sekarang.

Pemeriksaan oleh anggota partai UDT

41. Komisi telah menerima tiga pernyataan dari korban pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota partai UDT, yang terjadi dalam konteks konflik antarpantai. AA, seorang guru dan juga anggota organisasi Fretilin, Organisasi Rakyat Perempuan Timor (Organização Popular das Mulheres de Timor, OPMT), memberi kesaksian dalam audiensi publik tentang penangkapannya oleh anggota-anggota UDT pada 20 Agustus 1975 di Liquiçá:

[M]ereka menangkap saya dan membawa saya ke markas mereka [di kota Maubara] dengan sebuah mobil. Dalam perjalanan mereka memaki dan memukul saya, meludahi ke muka saya sambil berkata, "Fretilin tidak ada gunanya. Mereka membuat korek api saja tidak tahu, tapi mau merdeka." Mereka mengikat tangan saya ke belakang, menyumbat mulut saya dengan sepotong kain, menutup mata saya, dan mengikat kaki saya. Lalu mereka mengangkat tubuh saya dan buang saya ke dalam mobil seperti seekor babi yang terikat. Mereka selalu memukul, menendang, menyulut lutut dan paha saya pakai puntung rokok, memotong-motong paha saya dengan silet.

Sampai di sebuah sungai, ada seseorang berkata kepada teman-temannya yang lain, "Kita perkosa saja dia sebelum membawa dia ke komandan." Kemudian mereka meletakkan saya tidur di pinggir sungai tersebut. Setelah itu seorang memegang saya supaya saya tetap tidur terlentang, kemudian saya merasa ada seorang yang memerkosakan kesucian saya. Setelah mereka selesai, saya pusing dan diam saja. Melihat itu mereka menampar saya. Mereka kira saya pingsan dan tidak bisa merasa apa-apa, tapi pada waktu itu saya masih sadar.⁶

Pemeriksaan oleh anggota Fretilin dan Falintil

42. Komisi menemukan bukti mengenai tiga kasus pemeriksaan oleh anggota Fretilin yang terjadi dalam konteks konflik antarpantai.*

43. Dalam kesaksiannya kepada Komisi, BA1 menceritakan tentang pemeriksaan terhadap dua orang saudara perempuannya, BA dan CA dari Desa Purogoa (Cailaco, Bobonaro) pada 1975. Seorang anggota Fretilin bersenjata bernama PS4 menodongkan senjata dan memaksa BA1 dan kedua saudara perempuannya untuk pergi ke Aileu. Menurut BA1:

* Komisi memutuskan untuk menggunakan kata 'bukti' untuk semua kesaksian, fakta, dan keterangan yang diperoleh Komisi. Kata 'bukti' dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, cetakan ketiga, Dinas Penerbitan Balai Pustaka Djakarta, 1961, mengatakan bahwa bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dsb) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa tsb).

Karena pada saat itu kami adalah anggota UDT, PS4, dengan membawa sebuah Mauser [senapan], mengancam dua saudara perempuan saya, memaksa mereka untuk tidur dengannya. Karena mereka takut kehilangan nyawa, mereka menyerahkan diri kepada PS4. Ia memerkosa mereka dari malam sampai pagi.⁷

44. Setelah pemerkosaan tersebut, kedua perempuan itu dibebaskan.

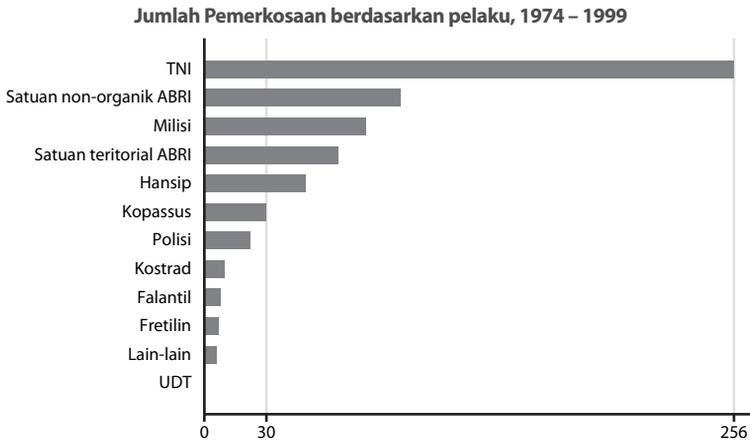
45. Pemerkosaan juga terjadi di tengah-tengah pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat. Tito Soares de Araújo mengatakan kepada Komisi bahwa pada November 1975 pasukan Fretilin mendirikan sebuah pos di *aldeia* Poerema, Miligo (Cailaco, Bobonaro). Menurut kesaksiannya, penduduk dipaksa memberikan bahan makanan dan perempuan muda diharuskan mengikuti pesta dansa. Setelah empat hari di Poerema, anggota pasukan Fretilin membunuh tiga orang yang mereka curigai sebagai mata-mata tentara Indonesia. Kemudian, komandan Fretilin yang bernama PS5 membunuh seorang laki-laki lain dan memerkosa istrinya.⁸

46. Pada 1976, A1 dan keluarganya lari dari rumah mereka di Desa Leber (Bobonaro, Bobonaro) ketika diserang oleh tentara Indonesia dan berjalan dari desa ke desa di subdistrik tetangga, Lolotoe (Bobonaro). Akhirnya mereka ditangkap oleh tentara Indonesia dan dikembalikan ke desa asal. Selama masa ini dua anggota keluarganya mati karena kekurangan makanan. A1 menyampaikan kepada Komisi mengenai kakak perempuannya, A, yang lari kembali ke hutan:

Pada tahun 1976 kakak perempuan saya, A, lari kembali ke hutan karena kami tidak punya makanan. Dia dicegat oleh pasukan Falintil di Desa Opa [Lolotoe, Bobonaro]. Komandan PS6 dan anak buahnya mengatakan bahwa kakak saya adalah mata-mata tentara Indonesia. Mereka menangkap dan memerkosanya. Setelah itu mereka memukul dia sampai mati di suatu tempat di daerah Tapo [Bobonaro, Bobonaro].⁹

Pemerkosaan selama masa pendudukan Indonesia (1975-1999)

47. Hampir semua kasus pemerkosaan yang didokumentasikan dalam basis data Komisi terjadi selama masa pendudukan Indonesia di Timor-Leste. Dari semua kasus itu, 51% (198/393) terjadi selama tahun-tahun awal invasi dan pendudukan Indonesia, dan 23% terjadi antara 1985 dan 1998. Sedangkan 26% kasus pemerkosaan lainnya terjadi dalam kekerasan seputar Jajak Pendapat pada 1999. Angka ini sesuai dengan data yang menunjukkan bahwa tentara Indonesia dan personel paramiliter pendukung, seperti anggota-anggota Hansip (Pertahanan Sipil) dan milisi, adalah pelaku dalam hampir semua kasus pemerkosaan yang dilaporkan. Dalam sejumlah kasus pemerkosaan individu dan kolektif, para pelaku dapat diidentifikasi dari nama atau kesatuan tentara atau kesatuan milisi di mana mereka menjadi bagian.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali, karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara beberapa pelaku

Pemerksaan oleh anggota Falintil

48. Komisi menerima laporan enam kasus pemerksaan yang dilakukan oleh anggota-anggota Falintil yang terjadi pada 1975 sampai 1999.¹⁰ Dalam konflik bersenjata itu, perempuan berisiko menjadi korban kekerasan seksual dari semua pihak. Walaupun demikian, Komisi mencatat bahwa angka pemerksaan yang dilakukan oleh Falintil jauh lebih kecil daripada yang dilakukan oleh personel militer Indonesia. DA1 menyampaikan kepada Komisi mengenai pemerksaan terhadap bibinya, DA, pada 1978 oleh seorang prajurit Falintil di Fatuk Makerek (Soibada, Manatuto). PS7, seorang anggota Falintil bersenjata, datang ke rumah DA dan memaksanya berhubungan seksual. Karena takut, DA menyerah. Walaupun PS7 kemudian berjanji untuk menikahi DA, ia meninggalkan daerah itu ditugaskan di tempat lain.¹¹

49. Dalam masa konsolidasi pendudukan Indonesia dari 1985 sampai 1998, perempuan tetap menghadapi bahaya pemerksaan oleh laki-laki bersenjata dari semua pihak. Misalnya, prajurit-prajurit Falintil masih melakukan pemerksaan di Ermera, meskipun sporadis, sampai 1998. EA dari Railaco Kraik (Railaco, Ermera) diperksa pada 16 Maret 1995 oleh seorang prajurit Falintil yang ia kenal sebagai PS8. EA percaya bahwa dirinya menjadi sasaran karena membuka sebuah kios di desanya dengan modal dari program bantuan pemerintah Indonesia. Suatu malam ketika suaminya sedang menjaga kios, PS8, dengan membawa sebilah pisau, masuk ke kamar tidur EA dan memerkosanya. Ia hamil akibat pemerksaan tersebut.¹²

50. Seorang prajurit lain Falintil bernama PS9 adalah pelaku pemerksaan berulang. Pada 1997, PS9 memerkosa FA di *aldeia* Donbati, Lisapat (Hatolia, Ermera). Dalam suatu pernyataan yang tragis kepada Komisi, FA menceritakan pengalamannya sebagai seorang perempuan yang rentan berhadapan dengan laki-laki bersenjata dari

kedua pihak yang berkonflik. PS9 dan seorang prajurit Falintil lain bernama PS10 memerkosa FA ketika ia membawa makanan untuk mereka di hutan. Satu bulan kemudian, ia ditangkap dan diperkosa oleh seorang prajurit ABRI dari kesatuan tempur Rajawali¹³ karena keterlibatannya mendukung Falintil.

Pada 16 Februari 1997 saya sedang membawa makanan untuk Falintil di Donbati, Lisapat. Dua orang tentara Falintil, PS9 dan PS10, mengikat leher saya dengan tali, membaringkan saya di sungai, dan menodongkan pisau ke saya, mengancam mau bunuh saya. Mereka melepas pakaian saya dan bergantian memerkosa, sambil terus mencekik saya dengan tali di leher. Mereka melakukan ini selama empat jam. Kemudian mereka kirim saya pulang, mereka ancam saya jangan kasih tahu siapapun kalau saya mau hidup.

Saya pulang dengan perasaan takut dan sakit kepala yang panas. Saya hampir tidak bisa jalan. Saya masih membawa makanan untuk Falintil dan pada 20 Maret 1997, ketika sedang membawa makanan ke aldeia Raihatu, saya ditangkap oleh pasukan Rajawali. Komandan mereka, PS374, yang memimpin sepuluh tentara, menampar saya empat kali dan menarik saya ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah, dengan memegang senapan AR-16, dia menelanjangi dan memerkosa saya. Setelah itu dia dan pasukannya pergi.¹³

51. PS9 juga disebutkan oleh seorang perempuan yang diperkosa di rumahnya sendiri. Pada 6 Desember 1998, GA menampung dan memberi makan PS9 di rumahnya di Uruhau (Hatolia, Ermera). Pagi berikutnya orangtuanya meninggalkannya di rumah dengan Lasoe sementara mereka pergi ke pasar untuk membeli makanan.

Tiba-tiba PS9 mengancam saya dengan pisau dan memutar tangan saya ke belakang. Saya meminta belas kasihan tiga kali supaya dia berhenti, tapi dia terus menarik saya ke dalam kamar tidur, melepas semua pakaian saya dan memerkosa saya selama satu jam. Saya tidak bisa teriak karena dia sudah menutup pintu dan menutup mulut saya dengan tangannya. Saat itu saya masih gadis, masih tidak berdosa. Setelah dia memerkosa saya, saya pingsan. Saya sendiri tidak sadar sampai dia membawa segelas air untuk saya minum. Saya melihat saya berdarah. Saya menangis karena saya masih gadis. PS9 berusaha untuk memberi saya Rp80.000 untuk pergi ke rumah sakit untuk perawatan, tapi saya menolak.¹⁴

.....
* Rajawali adalah nama sandi untuk kesatuan Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat (Kostrad) yang ditugaskan di Timor-Leste pada pertengahan dasawarsa 1990-an. Sebelumnya nama ini digunakan untuk menyebut pasukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Semua kasus dalam bab ini yang menyebutkan Rajawali sebagai pelaku adalah anggota Kostrad.

52. Pada Maret 1997 seorang anggota Falintil bernama PS11 tinggal di rumah HA di Desa Atara (Atsabe, Ermera). Tiba-tiba PS11 mengancamnya dengan sebilah pisau dan memerkosanya. Seperti EA, HA menjadi hamil akibat pemerkosaan tersebut.¹⁵

Pemerkosaan oleh anggota angkatan bersenjata Indonesia dan pasukan pembantunya: masa invasi dan operasi-operasi besar (1975-1984)

53. Laporan-laporan saksimata dan korban selama periode 1975-1984 menggambarkan beberapa pola praktik pemerkosaan: pemerkosaan yang dilakukan pada saat orang-orang yang telah lari ke gunung-gunung menyerahkan diri dan ditangkap (1975-1979); pemerkosaan berkelompok pada saat penyerangan bersenjata; pemerkosaan terorganisasi di pos atau kompleks militer, yang mencakup keterlibatan komandan-komandan setempat sebagai pelaku; pemerkosaan terhadap tahanan perempuan; dan pemerkosaan yang dilakukan oleh paramiliter dan orang-orang lain yang menganggap dirinya terlindung dari hukum karena afiliasinya dengan pasukan keamanan Indonesia.

54. Pemerkosaan, bersama dengan bentuk-bentuk penindasan lainnya, secara khusus terkait dengan periode-periode meningkatnya operasi-operasi militer oleh ABRI/TNI.* Ketika operasi militer Indonesia meningkat, meningkat pula kasus-kasus pemerkosaan.

A. Pemerkosaan pada saat menyerah (1975-1979)

55. Seperti yang telah dipaparkan dalam Bab 7.3: Pindahan Paksa dan Kelaparan, banyak penduduk sipil lari ke gunung-gunung pada saat invasi militer Indonesia pada 1975. Banyak dari mereka akhirnya menyerah atau ditangkap oleh tentara Indonesia antara 1975 dan 1979. Setelah menyerah, banyak yang ditempatkan di kamp transit atau kamp penampungan sementara yang berdekatan dengan pos-pos militer. Perempuan yang dianggap memiliki informasi strategis mengenai keberadaan pasukan Falintil, atau yang dianggap memiliki hubungan dengan mereka yang berada di gunung, menjadi sasaran pemerkosaan. Namun juga ada kasus-kasus pemerkosaan secara acak terhadap perempuan yang telah menyerah dan tidak mempunyai hubungan dekat dengan Resistansi.

56. IA masih berumur 17 tahun pada 1975 ketika keluarganya menyerahkan diri kepada pasukan tentara Indonesia. Keluarganya diperbolehkan kembali ke rumah mereka di *aldeia* Kolibau, Rairobo (Atabae, Bobonaro). Seorang anggota tentara Indonesia yang bersenjata dan mengenakan seragam, yang diketahui oleh korban bernama PS12, memaksa masuk ke rumah IA untuk memerkosanya. Pada awalnya

* Periode yang menjadi mandat Komisi, antara 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999, mencakup satu titik peralihan dalam militer Indonesia ketika ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) berpisah menjadi dua lembaga—satu militer, dan satu lagi kepolisian. Pada 1 April 1999, ABRI digantikan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). [Lihat Bagian 4: Rezim Pendudukan]

IA melawan, sehingga PS12 menariknya keluar dari kamar tidur orangtuanya, mendorongnya ke salah satu dinding rumah dan memerkosanya.¹⁶

57. JA1 dari Samaleten (Railaco, Ermera) mengisahkan kepada Komisi mengenai pemerkosaan terhadap saudara perempuannya, JA, yang dilakukan oleh empat orang tentara Indonesia dari Yonif (Batalion Infanteri) 512. Pada Desember 1975, JA1 dan keluarganya lari ke satu desa bernama Fatumaenhun, kemudian kembali ke Samaleten pada Agustus 1976 untuk menghindari gerakan ABRI. Pada akhirnya JA1 beserta suami dan kakaknya ditangkap dan dibawa ke kamp penampungan sementara di *aldeia* Aitoi, Malere (Aileu Vila, Aileu).

Pada April 1977 ada empat orang anggota Yonif [Batalion Infanteri] 512 masuk ke barak kakak saya JA dan memerkosanya secara bergantian. Sebelum diperkosa, mereka melepaskan semua pakaian kakak saya. Pada saat itu kakak saya sedang sakit dan tidak bisa bangun. Saya hanya berdiri menyaksikan pemerkosaan terhadap kakak saya, dan tidak bisa berbuat apa-apa karena takut. Kakak saya JA meninggal dua hari setelah diperkosa oleh [prajurit] ABRI.¹⁷

58. Orang-orang yang menyerah tidak hanya tidak berdaya terhadap prajurit-prajurit tentara Indonesia, tetapi juga terhadap orang Timor-Leste yang menjadi anggota tentara Indonesia beserta kelompok-kelompok pendukungnya, seperti Hansip. KA dan suaminya, KA1, menyampaikan kepada Komisi mengenai pemerkosaan terhadap KA pada 1977. KA beserta suami dan dua anaknya menyerahkan diri di satu desa bernama Fahinehan (Fatuberliu, Manufahi). Dari Fahinehan mereka dibawa ke Turisca (Manufahi), kemudian ke kamp penampungan di Edi (Maubisse, Ainaro), di mana mereka dipaksa menggali talas dan ubi jalar untuk seorang anggota Hansip, PS13. Setelah beberapa hari KA1 dipanggil oleh PS13 yang mengatakan, "Sekarang istri kamu menjadi istri saya, dan kamu mau bikin apa?" PS13 lalu memukuli kaki, tangan, dan paha KA1 dengan sebatang kayu selama kurang lebih satu jam sampai ia bersimbah darah. KA1 berhasil melarikan diri ke Dili setelah dipukuli. KA juga bersaksi mengenai upaya pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan bernama B oleh PS13 yang kemudian memerkosa KA dengan menodongkan senjata. Pemerkosaan itu berlanjut selama satu bulan.¹⁸

59. Pemerkosaan terjadi pada waktu interogasi atau ketika para perempuan dipaksa mengikuti operasi-operasi yang dilakukan militer untuk menemukan musuh. LA menyampaikan kepada Komisi mengenai pemerkosaan terhadap dirinya setelah ia menyerah di Uma Metan (Alas, Manufahi) pada 1978. LA dan dua temannya, MA dan LA1, pertama-tama dibawa ke Betano (Same, Manufahi) oleh empat anggota Hansip, masing-masing bernama PS14, PS15, PS16, dan PS17, dan kemudian diserahkan kepada Komandan PS20 dan dua anak buahnya, PS18 dan PS19 [orang Indonesia], di pos Yonif 327 di Fatukuak, satu tempat di Desa Fatukahi (Fatuberliu, Manufahi). LA dan dua orang perempuan itu diinterogasi di pos tersebut selama dua minggu. Suatu saat mereka bertiga diikat bersama dan disuruh berdiri di bawah

terik matahari. Karena sakit, LA1 dikirim pulang dengan anggota Hansip PS17, tetapi LA dan MA dipaksa ikut serta dalam suatu operasi militer di gunung untuk mencari anggota keluarganya. Sesampainya di sebuah tempat bernama Wekhau, kedua perempuan itu diperkosa oleh PS18 dan PS19. Kemudian mereka dipaksa ikut serta dalam operasi pencarian selama tiga hari tiga malam.¹⁹

60. Kadang-kadang seorang perempuan diperkosa setelah ia dibebaskan dari penahanan oleh laki-laki yang bisa memanfaatkan keadaan tersebut, seperti yang dilaporkan kepada Komisi oleh NA. Ketika NA menyerah di Dili pada 1978, kepala desa PS21 membawanya ke pos Nanggala* di Colmera (Dili) karena kedua kakak laki-lakinya masih berada di hutan. Ia ditahan di sana selama delapan bulan. Beberapa hari setelah pembebasannya, dua orang yang mengenalnya selama ia ditahan—PS22, seorang Timor-Leste penerjemah ABRI, dan PS23, yang bekerja sebagai seorang informan—menghentikan NA di kebun. Ketika melawan, NA ditampar, dicekik, dan akhirnya diperkosa oleh PS22 di kebun.²⁰

61. Orang-orang perempuan yang jelas diidentifikasi sebagai anggota atau pendukung Falintil menjadi sasaran kekerasan seksual. OA ditahan, disiksa, dan berkali-kali menjadi sasaran pemerkosaan karena dicurigai memberikan makanan kepada Falintil. Dalam kesaksiannya kepada Komisi, ia menceritakan bagaimana ia dan orang-orang lain menyerahkan diri kepada anggota-anggota Yonif 721 di sebuah tempat bernama Aifu (Ermera, Ermera) pada April 1976. Pada saat itu OA beserta enam orang kerabat dibawa ke Komando Distrik Militer (Kodim) Ermera. Dengan tuduhan memberikan makanan kepada Falintil, ketujuh perempuan tersebut disiksa, ditelanjangi, dipukuli, ditendang, dan disundut rokok di sekujur tubuh mereka. Setelah itu OA dan dua orang temannya ditahan di sel yang gelap dan diperkosa berkali-kali selama satu minggu. Akhirnya mereka dibebaskan dari sel gelap itu dan disuruh bekerja di pekarangan Kodim. Dua minggu kemudian mereka dilepaskan.²¹

B. Pemerkosaan berkelompok sebagai bagian dari penyerangan militer

62. Pemerkosaan tidak hanya terjadi pada waktu penyerahan diri tetapi juga terjadi pada waktu serangan militer. Beberapa kasus yang dilaporkan mengenai pemerkosaan berkelompok, di mana dua orang pelaku atau lebih memerkosa satu orang korban pada waktu dan tempat yang sama, terjadi pada saat atau tidak lama setelah terjadi suatu serangan militer.

63. PA memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai penyerangan oleh sepuluh orang tentara Indonesia terhadap keluarganya di Lauana (Letefoho, Ermera) pada 1976. Para prajurit tersebut menculik kakaknya, C, dan membawanya ke satu tempat bernama Katrai Leten (Letefoho, Ermera). Di sana 10 orang prajurit ABRI tersebut memerkosanya secara bergantian. PA ketakutan tapi berhasil lari ke hutan,

.....
* Nanggala adalah nama sandi untuk satu kesatuan Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) yang ditugaskan di Timor-Leste untuk operasi tempur mulai sekitar Oktober 1975 sampai April 1983. Penelitian Komisi menunjukkan bahwa tiga kompi telah dikirimkan ke Timor-Leste untuk masa enam bulan sebelum kembali ke markas masing-masing [lihat Bab 4: Rezim Pendudukan].

meninggalkan ibu dan kakaknya. Dua tahun kemudian ia tertangkap dan dijerumuskan ke dalam situasi perbudakan seksual oleh seorang prajurit tentara Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam bagian mengenai perbudakan seksual pada bab ini.²²

64. QA tidak diperkosa di medan pertempuran, melainkan di sebuah pos militer setelah terjadinya suatu penyerangan. Pada 1978, ia dan sekelompok penduduk desa sedang mencari makanan di satu tempat dekat tempat tinggalnya di Vila Uatolari (Uatolari, Viqueque). Tiba-tiba, anggota-anggota Yonif 732 dan Hansip menyerang mereka. Tiga orang penduduk desa mati dalam serangan ini. QA dan 11 orang perempuan dibawa ke pos Yonif 732 di mana QA diperkosa. Ia mengatakan kepada Komisi:

Pada 1978 dua anggota Hansip bernama PS24 dan PS25 serta tentara dari Batalion 732 menangkap saya dan 11 perempuan lainnya di sebuah tempat yang bernama Bubulita. Mereka membawa kami ke pos militer di mana mereka menginterogasi kami. Ketika interogasi sedang berlangsung, PS24 dan PS25 memerintahkan saya masuk ke tempat komandan 732. Mereka mengatakan bahwa saya akan diinterogasi, tapi itu bohong. Mereka membawa saya ke sana untuk memerkosa saya. Komandan itu memerkosa saya selama 24 jam. Mereka bergantian memerkosa saya, semuanya, lima belas orang itu. Saya harus mengalami hal ini supaya mereka tidak membunuh 11 perempuan yang ditangkap bersama saya.²³

65. RA dan seorang temannya diperkosa berkelompok oleh anggota-anggota Batalion Infanteri Lintas Udara (Yonif Linud) 100 yang ditugaskan di Leulobo, satu tempat di Desa Mau Chiga (Hatu-Builico, Ainaro) pada 1977. Pemerksaan yang berulang kali ini berdampak serius pada kesehatan mereka dan menyebabkan perdarahan yang berlangsung selama beberapa minggu.²⁴

66. SA1 menyampaikan kepada Komisi mengenai serangan yang dilakukan oleh tentara Indonesia di Kiarbokmauk (Alas, Manufahi) pada 24 Desember 1979, ketika ia bersama saudara sepupunya, SA, sedang membawa makanan dan obat-obatan untuk Falintil. Prajurit-prajurit tentara Indonesia berulang kali memerkosa SA. Setelah pemerksaan tersebut, ia tidak dapat berjalan dan harus dibawa pulang diangkut dengan kuda.²⁵

67. TA adalah tokoh Fretilin yang terkenal yang berteman dengan komandan Falintil, TA1. Pada 1979, ia dan TA1 bersama dengan dua orang anggota Falintil yang mengawal mereka, TA2 dan TA3, diserang oleh ABRI. TA1 tertembak mati, tetapi TA dan dua orang yang mengawalnya berhasil melarikan diri. Kemudian Hansip dan pasukan ABRI di Alas (Manufahi) menangkapnya. Para prajurit itu memotong telinga kedua pengawal Falintil tersebut, TA2 dan TA3. TA ditodong dengan senjata dan diperkosa selama dua malam.²⁶

C. Pemerksaan di instalasi militer

68. Pemerksaan tidak hanya dilakukan oleh anggota tentara di tengah pertempuran, tetapi juga terjadi di instalasi militer. Komisi telah mencatat kasus-kasus di mana

anggota militer memanggil perempuan untuk diperkosa. Dalam beberapa kasus, komandan setempat bukan saja gagal mencegah pemerkosaan atau menghukum para pelakunya; mereka sendiri justru menjadi pelaku kejahatan tersebut.

69. UA3 mengisahkan kepada Komisi mengenai penahanan suami dan ayahnya, UA2 dan UA4 di *aldeia* Maulakoulo, Humboe (Ermera, Ermera) oleh para prajurit Yonif 726 pada Februari 1976. Setelah penangkapan mereka, UA2 dan UA4 ditahan dan disiksa di markas Kodim Ermera. Pada Agustus tahun yang sama, ayah dan saudara perempuan suaminya, UA1 dan UA, juga dipanggil ke markas Kodim. UA dipaksa masuk ke sebuah ruangan dan diperkosa oleh Kepala Seksi I Intelijen (Kasi I Intel) yang dikenal bernama PS26. Tidak berhenti di sini, ia kemudian menyuruh seorang Hansip untuk menangkap saudara perempuan MT yang bernama VA. IQ dibawa dengan paksa ke Kodim Ermera, selanjutnya dipindahkan ke rumah milik seorang guru setempat di mana ia kemudian diperkosa oleh PS26. Setelah dua pemerkosaan tersebut, UA, VA, dan dua tahanan—UA4 dan UA1—dibebaskan. PS26 membawa UA2 untuk dijadikan Tenaga Bantuan Operasi (TBO).²⁷

70. Dalam kesaksiannya, WA dari Desa Afaloicai (Uatolari, Viqueque), mengungkapkan bagaimana dirinya ditahan, disiksa, dan diperkosa berkali-kali setelah menyerah di Uatolari pada April 1979:

PS27 [seorang Timor-Leste anggota Partisan] datang ke rumah saya untuk memberitahu saya bahwa tentara memanggil saya ke Koramil [Komando Distrik Militer] dan saya harus cepat-cepat. Saya takut sehingga saya ikut saja ke Koramil. Saya membawa anak saya yang paling kecil yang baru berumur satu setengah tahun dan meninggalkan yang lebih besar dengan bibinya. Ketika saya tiba PS27 meninggalkan saya menunggu di dalam satu ruangan dan pergi keluar. Tiba-tiba seorang tentara masuk dan meminta saya untuk berhubungan seks dengannya tapi saya menolak. Ia marah, menarik anak saya dari saya dan meletakkannya di tanah. Kemudian ia memerkosa saya di depan anak saya yang menangis dan berteriak-teriak karena takut.²⁸

Pemerkosaan di Komando Rayon Militer (Koramil) Uatolari 1979-1981

Pemerkosaan terhadap WA di markas Koramil Uatolari bukanlah satu-satunya kasus. Sebaliknya, Komisi telah mengumpulkan bukti yang menunjukkan tingginya angka pemerkosaan yang terjadi di Koramil Uatolari, Viqueque. XA, YA (lihat bagian mengenai Kekerasan Seksual dalam Bab 7.8: Hak Anak), dan ZA memberikan kesaksian yang saling mendukung tentang pemerkosaan terhadap mereka selama penahanan di Koramil Uatolari dari 1979 hingga 1981 yang melibatkan sedikitnya sembilan pelaku berikut ini:

- PS28: anggota Hansip dan intelijen ABRI; PS29, sudah meninggal
- PS30: orang Timor-Leste anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) II
- PS31: kepala desa Babulu
- PS379: orang Timor-Leste anggota kepolisian berpangkat kopralsatu
- PS32, PS33, PS34, PS35: anggota Hansip

Pada sekitar 1979, XA turun dari gunung dan pergi ke Uatolari Vila di mana ia ditangkap oleh PS30 dan seorang anggota ABRI yang namanya tidak diketahui. Ia disiksa karena menolak memberikan informasi mengenai keberadaan Falintil di hutan. Ia ditelanjangi, disundut dengan rokok, disodok dengan sebatang kayu di bagian vagina, dipukuli, ditinju, dan ditendangi. Kemudian PS30 membawa XA dan delapan orang lainnya, termasuk XA1, XA2, XA3, ZA, dan YA, ke sebuah rumah yang biasa digunakan oleh tentara Koramil untuk tempat menahan. Di sana, dua anggota Hansip, PS36 dan PS33, menyiksa semua tahanan dan memerkosa XA di depan para tahanan lainnya. Hari berikutnya, tiga anggota Hansip, PS37, PS31, dan PS38 datang ke tempat penahanan. Mereka menelanjangi XA, kemudian memukul, menendang, dan meninjunya sampai mengucurkan darah. Kemudian ketiga orang itu bergantian memerkosanya lagi di depan para tahanan yang lain. XA ditahan selama 16 hari dan selama waktu itu lima anggota Hansip tersebut bergantian memerkosanya sampai alat kelaminnya luka dan bengkak sehingga ia tidak bisa berjalan lagi. Ketika para pelaku menganggap cukup, mereka memaksa para tahanan laki-laki untuk memerkosa Isabel dan teman-temannya. Ketika XA dibebaskan, ia tidak bisa berjalan karena pinggulnya patah, maka seorang tentara membawanya kembali ke rumahnya. Ketika ia tiba di rumah, keluarganya merawatnya dengan obat-obatan tradisional. Sejak saat itu XA selalu diawasi dengan ketat oleh intelijen ABRI dan akhirnya ia melarikan diri ke Dili.²⁹

Pada 1979 YA dan suaminya, XA2, ditangkap dan dibawa ke Koramil Uatolari. Setibanya di sana, anggota-anggota Hansip melepaskan pakaian YA, kemudian mencampakkannya ke tanah. Seorang anggota ABRI lalu mengencingi pakaiannya dan para anggota Hansip bergantian memerkosa YA di depan suaminya. Mereka yang melakukan pemerkosaan termasuk anggota-anggota Hansip yang bernama PS39, PS32, PS33, dan PS34. Selama masa penahanannya di Koramil Uatolari, para anggota Hansip tersebut datang dan membawanya setiap malam untuk memerkosa dan mengancamnya. Setelah itu mereka mengembalikannya ke tahanan Koramil.³⁰

ZA, yang suaminya adalah seorang anggota Falintil yang berjuang di hutan, diambil tengah malam oleh sekelompok tentara pada

November 1979. Ia terpaksa membawa anaknya yang berumur tujuh tahun ke markas Koramil.

Ketika saya tiba pada malam hari mereka mengumpulkan kami para perempuan di dalam sebuah ruangan. Tidak lama setelah itu seorang anggota Hansip bernama PS35 datang membuka pintu bagi para tentara untuk membawa perempuan-perempuan itu untuk diperkosa. Setiap malam tentara-tentara itu datang mengambil perempuan. Mereka juga datang kepada saya tapi saya menipu mereka dengan mengunyah sirih dan melumuri cairan merahnya di paha bagian dalam saya supaya ketika mereka datang dan melepas kain sarung saya dan melihat alat kelamin saya, mereka akan mengira saya sedang menstruasi, padahal tidak. Pada suatu malam seorang anggota Hansip, PS41, membawa saya dengan paksa ke dalam sebuah ruang interogasi. Ia memukul saya, menendang saya, dan menyundut badan saya dengan puntung rokok. Kemudian ia merobek pakaian saya dan memerkosa saya. Saat itu anak saya yang berumur tujuh tahun ditinggal di dalam penjara.³¹

Menurut kesaksian-kesaksian ketiga perempuan ini, banyak perempuan lainnya yang ditahan di Koramil Uatolari yang memiliki pengalaman kekerasan seksual yang sama, tapi karena mereka datang dari desa lain, nama-nama mereka tidak diketahui. Walaupun AB ditangkap beberapa tahun setelah XA, YA, dan ZA, kesaksiannya mendukung bukti-bukti mengenai pola kekerasan seksual yang terjadi di Koramil Uatolari. Pada 1981, AB diambil dari rumahnya oleh empat anggota Hansip yang dikenal olehnya sebagai PS41, PS42, PS43, dan PS44.³² Mereka membawanya ke Koramil Uatolari di mana ia ditahan selama satu minggu dan diperkosa secara bergantian oleh empat orang tentara Indonesia yang tidak ia ketahui namanya. Akhirnya ia dibebaskan setelah ditahan selama dua bulan di Viqueque.

71. Pengalaman BB mirip dengan WA. BB dan menantu perempuannya, CB, ditangkap pada 1981 dan ditahan di sebuah pos ABRI di Rotutu (Same, Manufahi) karena suami mereka adalah anggota Falintil dan masih berada di hutan.

Mereka membawa kami berdua ke pos ABRI. Lalu seorang komandan bernama PS393 memerkosa saya dan salah satu anak buahnya memerkosa menantu perempuan saya yang waktu itu sedang hamil. Mereka menahan kami bersama dua perempuan lainnya dari Hato Udo. Mereka menahan menantu perempuan saya karena suaminya masih ada di hutan...kami terus-menerus diperkosa selama tujuh bulan walaupun saya sudah tua dan menantu perempuan saya mengandung. Kemudian kami dikirim ke tahanan di Kodim 1634 di

Manufahi selama tujuh bulan dan di sana kami tidak diperkosa lagi. Saya dikirim ke Ataúro dengan anak-anak saya, yang berumur empat dan enam. Kami tinggal di Ataúro selama empat tahun, tujuh bulan, dan tujuh hari.³³

72. Pada 1981 di Tutuala (Tutuala, Lautém), seorang yang diidentifikasi sebagai Komandan Koramil PS45 memerkosa seorang perempuan bernama DB. Tanggal 17 Juli 1981, pada peringatan “Hari Integrasi” di Tutuala, DB harus memasak dengan para anggota organisasi perempuan bentukan pemerintah, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Menurut kesaksian saudara laki-lakinya, DB1, ketika DB sedang sibuk memasak tiba-tiba ia dipanggil keluar dari dapur oleh Komandan Koramil PS45. Tetapi, menurut Raul dos Santos, “karena adik saya tidak mau, maka ia menariknya ke dalam sebuah kamar lalu memerkosanya...baju adik saya dirobek semua.”³⁴

73. EB adalah satu-satunya perempuan dari delapan orang yang ditangkap pada 1979 di Selo Malere (Aileu, Aileu) oleh satu peleton ABRI dari Koramil Remexio (Aileu). Kedelapan orang itu dibawa ke Kodim Aileu, kemudian dipindahkan di Koramil Remexio kira-kira satu minggu kemudian. Dari situ mereka dipaksa mencari EB1, suami EB, yang telah melarikan diri ke hutan ketika yang lainnya ditangkap. Pada akhirnya, semua laki-laki dilepaskan tetapi EB tetap ditahan di Kodim Aileu. Pada suatu hari ia dipindahkan dari Kodim Aileu dan dibawa ke perumahan militer Aileu oleh seseorang berpangkat letnan dua. EB diperkosa berulang kali selama dua hari sebelum dikembalikan ke Remexio.³⁵

74. CB menyampaikan kepada Komisi mengenai penculikan, penahanan, pemerkosaan terhadap dirinya dan paksaan ikut dalam operasi ABRI mencari Fretilin. Pada 1979, CB ditangkap di Manulesi oleh seorang anggota Hansip dan kepala desa Rotutu (Same, Manufahi) yang bernama PS237. CB dibawa dengan paksa ke pos pasukan komando di Same. Di tempat ini, menurut penuturannya kepada Komisi, “Saya diperkosa berkali-kali selama satu bulan”. CB dipaksa pergi ke hutan untuk mencari suaminya. Ketika ia tidak berhasil, ia dipukuli dengan popor senapan. Seorang Sersan Mayor yang diketahui bernama PS47 mau berhubungan seks dengan CB. PS47 mengatakan bahwa apabila ia menolak berarti ia “masih mencintai suaminya yang ada di hutan”. Pemerkosaan berlangsung selama satu bulan. CB dipindahkan ke Aissirimou (Aileu Kota, Aileu) di mana di dipaksa bekerja di sawah selama enam bulan dengan satu kelompok lain. Akhirnya, Komite Internasional Palang Merah turun tangan dan ia dapat kembali ke desanya.³⁶

75. FB1 mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh anggota keluarganya pada 1981 di markas Kodim Manatuto. FB1 dan empat anggota keluarganya ditangkap oleh anggota ABRI dan dibawa ke pos BTT (Batalion Tugas Teritorial) di Mota Hasoru-Malu, Manatuto. Di sana mereka ditahan dan diinterogasi mengenai kegiatan Falintil. Kemudian mereka dipindahkan ke pos BTT di Raemeen dan akhirnya dibawa dengan satu kendaraan ABRI ke Kodim di Manatuto. Di Kodim ini tahanan laki-laki disiksa, sementara saudara perempuan FB setiap malamnya diperkosa oleh PS48, seorang anggota ABRI.³⁷

Pemeriksaan terhadap tahanan laki-laki

Sesuai dengan hukum kasus pengadilan internasional, laki-laki juga bisa mengalami pemeriksaan. Beberapa tahanan laki-laki diperkosa di masa pendudukan Indonesia. Biasanya, pemeriksaan laki-laki terjadi dalam konteks penyiksaan.

Dulce Vitor, seorang tahanan di kamp polisi militer di Baucau pada 1978, memberikan bukti terjadinya pemeriksaan terhadap tahanan laki-laki:

Ketika saya ditahan di markas POM [Polisi Militer] di Baucau, sekitar bulan November-Desember 1978, saya melihat tahanan laki-laki mengalami pelecehan seksual dan pemeriksaan. Para tahanan laki-laki diikat dan ditelanjangi, kemudian anggota ABRI dan [anggota] Partisan memasukkan batang kayu ke dalam anus mereka. Mereka berteriak karena tidak tahan sakit, namun tidak dihiraukan oleh ABRI. Semakin mereka berteriak, prajurit-prajurit ABRI itu semakin kuat dan cepat mendorong kayu keluar masuk ke anus mereka. Para tahanan perempuan dipaksa untuk keluar dari tempat tahanan untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap para laki-laki itu. Tahanan perempuan juga ada yang dipaksa oleh ABRI untuk memegang dan meremas-remas alat kelamin para tahanan laki-laki. Saya tahu bahwa hal ini juga terjadi di tempat-tempat penahanan lainnya di Baucau, tapi yang saya lihat dengan mata kepala sendiri terjadi pada lima orang laki-laki yang namanya saya tidak tahu di POM Baucau.³⁸

Pada 1984, dua bersaudara, GB dan HB, ditangkap oleh anggota ABRI di desa mereka di Lore I (Lospalos, Lautém) dan dibawa ke Pos Komando 4 ABRI di Maluro, Lore I (Lospalos, Lautém). GB, yang lebih muda, adalah yang pertama ditahan dan dipukuli. Ia dipaksa mengaku bahwa saudaranya, HB, memberikan makanan kepada Falintil. HB pun ditahan dan disiksa. Ia dipukuli dan dipaksa untuk makan cabai, garam, dan kotoran manusia. Ia menceritakan kepada Komisi penyiksaan dan pemeriksaan yang dialaminya:

Beberapa hari kemudian mereka mulai memisahkan adik saya, GB, dari saya dan tahanan-tahanan lain. Ia dibawa ke hutan dekat pos Komando di Maluro. Ketika GB kembali ia memberitahu saya bahwa PS49 telah [membuatnya melakukan] seks oral dengannya, sampai ia [GB] hampir muntah. Tiba-tiba PS49 muncul dan langsung bertanya kepada saya, "Kamu mau hidup atau mati?" Saya menjawab bahwa saya ingin hidup, maka PS49 membawa saya ke sebuah kebun tua yang tidak terurus dan membuat saya duduk di atas tumpukan batu dan membuat saya melakukan seks oral untuknya. Ia membuat saya menelan spermanya. [Pada kejadian

yang lain] saya masih merasa pusing akibat siksaan sampai saya [hampir] pingsan. Seorang Timor-Leste komandan ABRI [pangkat tidak jelas] bernama PS50 memasukkan penisnya ke dalam mulut saya, kencing di dalam mulut saya dan membuat saya menelan kencingnya. Saya sangat takut jadi saya telan.³⁹

76. IB1 memberikan pernyataan kepada Komisi mengenai saudara perempuannya, IB, yang diperkosa berkelompok oleh anggota-anggota ABRI di Kodim Ainaro pada 1981. Sebelumnya pada tahun yang sama, enam orang tentara datang ke rumah IB di *aldeia* Poelau, Soro (Ainaro, Ainaro). Mereka menangkap IB dan saudara laki-lakinya, IB2, dan membawa mereka ke markas Kodim di Ainaro. Setibanya di sana, sudah ada lima perempuan lain. Mereka semua dipukuli dan disundut dengan puntung rokok oleh orang-orang yang menginterogasi mereka. Menurut kesaksian saudara laki-lakinya, beberapa prajurit ABRI memerkosa IB karena suaminya anggota aktif Falintil.⁴⁰

77. Informasi yang dikumpulkan Komisi menunjukkan tingginya tingkat pemerkosaan yang terjadi seiring dengan meningkatnya penahanan massal dari 1982 hingga 1984. Misalnya, penahanan yang berkaitan dengan insiden-insiden di Desa Mau Chiga (Hato Builico, Ainaro) dan Kraras, Bibileo (Viqueque, Viqueque). Sejumlah kasus pemerkosaan ini terjadi di pos-pos atau markas-markas militer.

78. JB1 menyampaikan kepada Komisi pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh dirinya dan keluarganya akibat pemberontakan Mau Chiga kepada Komisi. Anak perempuannya, JB, ditangkap pada 5 September 1982 di rumah mereka di Dare (Hato Builico, Ainaro) oleh prajurit-prajurit ABRI dan tiga anggota Hansip—PS51, PS52, dan PS53—kemudian dibawa ke markas Kodim di Ainaro. Suaminya, JB2, yang ditangkap pada 30 Agustus 1982, dan anak laki-lakinya, JB3, ditangkap pada 3 September 1982, juga dibawa ke Kodim Ainaro di mana mereka kemudian disiksa. Di Kodim Ainaro, JB dipukuli, ditendang, disetrum, disundut dengan rokok di kakinya, dan akhirnya diperkosa oleh Komandan Kodim yang dikenal sebagai PS394. Ia juga diperkosa oleh seorang anggota Hansip bernama PS53 dan seorang anggota ABRI yang namanya tidak ia ketahui. Kemudian pada hari yang sama ketika ia ditangkap, JB dan saudara laki-lakinya dipindahkan ke Penjara Balide di Dili (ayah mereka sudah berada di sana). Dua hari kemudian, ayah dan saudaranya, bersama dengan tahanan-tahanan lainnya, dinaikkan ke sebuah kapal menuju Pulau Ataúro.⁴¹

79. Dalam insiden Mau Chiga, tidak hanya Hansip dan prajurit berpangkat rendah yang memerkosa perempuan, tetapi juga para komandan militer, seperti yang jelas dari kesaksian KB. Pada 20 Agustus 1982, tujuh orang yang masing-masing adalah KB, saudara perempuan KB bernama LB, dan lima orang lainnya ditahan di *aldeia* Surhati, Mau Chiga, oleh anggota Hansip PS54, PS55, PS56, PS57, dan PS58. Mereka dibawa ke Koramil di Dare di mana mereka dipukuli dengan popor senapan dan ikat pinggang dan seluruh tubuh mereka ditusuk dengan batu yang tajam sampai mereka bercucuran darah. Satu hari sesudah mereka dilepaskan, anggota Hansip yang sama menyerang KB di rumahnya. Mereka memukulinya dengan sebatang

linggis dan tongkat, menyayat tangannya dengan pisau dan kemudian menusuk payudaranya dengan moncong senapan. Dua hari kemudian, seorang komandan berpangkat tinggi dari Kodim Ainaro yang dikenal sebagai PS59 membawa dengan paksa ketujuh orang itu dengan sebuah minibus ke Kodim di Ainaro. Di Kodim mereka ditahan di dalam sel yang sama dan PS395 ikut menyetrum pipi dan alat kelamin mereka. PS59 memerkosa KB, yang pada saat itu sedang hamil dua bulan, dan saudara perempuannya, LB, di dalam sel mereka di Kodim Ainaro.⁴²

80. Dalam tahun yang sama, anggota Hansip PS54 dan PS380 menahan MB dan NB di Surhati, Mau Chiga (Hato Builico, Ainaro) karena suami mereka dicurigai sebagai komandan Falintil yang terlibat dalam pemberontakan Mau Chiga. Kedua perempuan itu dibawa ke markas Koramil di Dare di mana komandan Koramil dan PS54 memerkosa MB sepanjang malam. Keesokan harinya ia dibebaskan, tapi dua hari setelah ia tiba di rumah, PS60, seorang anggota Hansip, datang ke rumah MB. Ia mengancamnya dengan senjata dan memerkosanya. Pemerkosan-pemerkosan berlanjut selama satu bulan.⁴³

81. OB dan PB dari Lifau (Laleia, Manatuto) ditahan dan diperkosa di Kodim Manatuto pada 1982. Karena saudara laki-laknya seorang pejuang Falintil, OB bersama temannya PB dibawa oleh dua anggota Hansip bernama PS62 dan PS63 ke Kodim di Manatuto. Di sana mereka diinterogasi oleh Kepala Staf Kodim (Kasdim) yang namanya tidak diketahui. Setelah dua hari dalam penahanan, OB dibawa ke sebuah ruangan dan diperkosa oleh Kasdim itu. Pada awalnya OB menolak dan karena itu ia dipukuli. Pada akhirnya ia “tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menangis”. Satu minggu kemudian kedua perempuan tersebut dilepaskan. Tidak lama setelah itu, OB hampir diperkosa oleh seorang anggota Hansip bernama PS64, yang mendekatinya dengan senjata ketika ia dalam perjalanan ke kebun untuk bekerja. Karena seorang TBO kebetulan lewat, OB berhasil melarikan diri. Namun, ibu dan saudara perempuannya, OB1 dan OB2, ditahan dan dibuang ke Ataúro tidak lama setelah kejadian ini.⁴⁴

82. Karena suaminya seorang anggota Hansip yang melakukan desersi dan melarikan diri ke hutan untuk bergabung dengan Falintil, QB ditangkap oleh dua orang TBO pada Maret 1984 di desanya di Mehara (Tutuala, Lautém). Ia mengenal kedua orang TBO dari Yonif 641 tersebut sebagai PS65 dan PS66. Ia dibawa ke pos Yonif 641 di Herana-Poros (Lautém) bersama dengan seorang perempuan lain. Setibanya di Koramil, QB disuruh masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan senjata dan, dalam kegelapan, ia diinterogasi mengenai suaminya. Seorang tentara bernama PS67 [orang Indonesia] “mulai menyentuh tubuh saya, mencium bibir saya, membakar saya dengan rokok, kemudian memukul dan meremas perut saya, agar anak dalam kandungan saya gugur.” Kemudian ia diperkosa oleh PS67.⁴⁵

83. RB mengungkapkan kepada Komisi mengenai pengalamannya di pos militer yang sama, Yonif 641, pada Oktober 1984. Pada waktu itu ABRI telah menahan suaminya di Lospalos (Lautém). RB dan seorang perempuan lain dipanggil ke Koramil oleh seorang TBO, berdasarkan sebuah daftar yang dibuat ABRI. Komandan dan wakil komandan pos tersebut memerkosa mereka berdua. RB mengatakan kepada Komisi:

ABRI tidak melihat status perempuan yang mau diperkosa—apakah ibu atau masih gadis. Yang menjadi sasaran mereka adalah perempuan dari Timor Timur bukan dari provinsi lain, saya tidak tahu apa alasan mereka sehingga mereka mau mencari perempuan Timor Timur saja. Biasanya mereka menyuruh TBO mereka untuk menjemput perempuan yang telah terdaftar—entah mereka bekerja untuk klandestin atau keluarga mereka lari dan berada di hutan—untuk diinterogasi, disiksa, dan kemudian diperkosa...Sepertinya pos yang biasanya didirikan untuk menjaga keamanan malah dijadikan tempat khusus untuk melakukan pemerkosaan terhadap perempuan. Saya melihat banyak sekali perempuan yang dibawa ke sana untuk diperkosa di tempat yang sama. Tapi sayang sekali karena saya tidak tahu semua nama mereka, saya hanya tahu beberapa nama saja. [12 nama yang terdaftar]⁴⁶

Pemerkosaan terhadap tahanan perempuan di Hotel Flamboyan

Hotel Flamboyan di Bahú (Baucau Kota, Baucau) adalah salah satu dari tempat-tempat penyiksaan yang paling ditakuti di Distrik Baucau yang terletak di bagian timur negeri. Selain hotel tersebut ada sembilan tempat penyiksaan lain di Baucau Kota, yaitu markas Kodim dan Koramil, Uma Lima (Rumah Lima), Rumah Merah, Clubo Municipal, RTP (Resimen Tim Pertempuran) 12, RTP 15, RTP 18, dan kantor Kepolisian Resor (Polres). Tahanan laki-laki dan perempuan dicacimaki, dipukul, ditendang dengan sepatu tentara, disundut dengan puntung rokok, jari-jari tangan dan kaki mereka ditindih kaki-kaki kursi, dan mereka ditahan di sel isolasi untuk jangka waktu yang lama. Penyerangan seksual terhadap tahanan perempuan adalah perbedaan utama antara pengalaman laki-laki dan perempuan dalam penahanan. Ketika mereka disundut dengan puntung rokok, payudara dan alat kelamin mereka sering menjadi sasaran. Ketika mereka ditelanjangi selama interogasi, ancaman pemerkosaan adalah beban tambahan bagi para tahanan perempuan. Sedikitnya 30 tahanan perempuan yang diketahui ditahan di Hotel Flamboyan dan di pusat-pusat penahanan lainnya di Kota Baucau pada Desember 1975-1984 disiksa. Hampir sepertiga dari mereka juga diperkosa.

Bagi mereka yang keluarganya ditahan, tidak adanya informasi mengenai tempat dan keadaan mereka menjadi keprihatinan sehari-hari. SB1 baru berumur sepuluh tahun ketika kakak perempuannya SB, dua saudara laki-laki, paman, dan bibinya diambil dari rumah mereka pada Juli 1976:

Mereka diikat hanya dengan satu rantai bersama-sama dan dipaksa jalan berjajar. Saya dan sepupu-sepupu saya, kami lari ikut mobil yang datang menangkap kakak saya, waktu itu umur kami tujuh sampai sepuluh tahun, sambil berteriak, “Kalian mau bawa kakak kami ke mana?!”

[Setelah dua hari mencari mereka di Flamboyan], ada di antara mereka [anggota ABRI] memberitahu kami, “Coba kalian cari di Rumah [Uma] Lima, kemungkinan mereka ada di sana.” Setibanya di sana...seorang TBO melewati depan kami, TBO tersebut orang Baucau...Saat kami tanya, TBO tersebut memberitahukan kepada kami bahwa anggota keluarga kami ada di sana. Kami sedikit lega dan makanan yang kami bawa kami serahkan ke ABRI untuk diberikan kepada anggota keluarga yang namanya kami sebutkan. Sorenya harinya kami ke Rumah Lima untuk mengantar makanan...mereka sudah tidak ada, hanya tempat makanan mereka disimpan di pos ABRI. Kami bertanya kepada mereka tentang keberadaan keluarga kami, tetapi mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu. Saat itu juga saya melihat banyak mayat yang dibawa keluar untuk dimuat dalam mobil. Mayat-mayat tersebut dimasukkan ke dalam karung-karung beras berwarna cokelat. Karung cokelat terlalu pendek untuk memuat mayat, sehingga ada mayat yang kepalanya di luar karung, rambut dari mayat-mayat tersebut berantakan... Mereka membuang mayat ke dalam mobil seperti membuang kayu bakar...ABRI juga menyiksa para tahanan seperti memukul binatang, ada tahanan yang berteriak...

Saya bersama orang-orang yang keluarganya tidak ada di Rumah Lima...berangkat ke Flamboyan. Ternyata keluarga kami ada di sana...Keesokan harinya kakak SB dilepaskan untuk pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah sikapnya sudah berubah, setiap hari dia lebih banyak diam dan suka mengurung diri. Dia sempat cerita kepada saya dan anggota keluarga yang lain semalam dia ditahan di Flamboyan, dia diinterogasi, dipukul, dan dikurung bersama tahanan laki-laki, mereka saling berdesakan laki-laki maupun perempuan sehingga mereka tidak tidur sampai pagi. Selain dari itu dia diikat berhadapan dengan tahanan laki-laki lain, setelah itu diperkosa oleh [seorang anggota] ABRI. Saat dia menceritakan tentang apa yang dia alami, dia menangis histeris, kemudian tertawa sendiri. Dia terpukul dan menjadi trauma. Setelah kejadian itu ABRI sering datang ke rumah kami, dengan alasan melamar kepada orangtua kami untuk menikahi SB. Namun tidak direstui. ABRI baru berhenti datang ke rumah setelah SB sudah menikah. SB meninggal dunia setelah beberapa tahun...meninggalkan dua orang anak laki-laki.⁴⁷

TB diculik ketika sedang hamil dua bulan dan ditahan di Hotel Flamboyen selama enam bulan. Ia ditelanjangi, disetrum, dan diperkosa dalam posisi berdiri. Penyiksaan dan pemerkosaan yang dialaminya sangat kejam sampai-sampai ia pada akhirnya setuju untuk menjadi “istri” seorang anggota Yonif 744 agar bisa dibebaskan.⁴⁸

Kadang-kadang penahanan, penyiksaan, dan pemerkosaan terhadap perempuan di Hotel Flamboyen jelas merupakan bentuk kekerasan pengganti (*proxy violence*). UB1, anak perempuan dari seorang pemimpin Fretilin Baucau, bersama dengan VB1 dan VB2, keduanya anak perempuan dari seorang pemimpin lain Fretilin Baucau, termasuk perempuan-perempuan pertama yang ditahan di Hotel Flamboyen. UB1 menyampaikan kepada Komisi mengenai pemerkosaan yang terjadi berkali-kali terhadap UB yang suaminya adalah seorang Komandan Falintil. UB1 merawat ketiga anak UB yang masing-masing berumur lima, empat, dan dua tahun, ketika ia ditahan secara terpisah di sebuah ruangan di lantai dua hotel tersebut, di mana anggota ABRI menyiksa dan memerkosanya. UB1 mengenang bagaimana perempuan-perempuan dan anak-anak yang ditahan di lantai pertama mendengar teriakan UB tiap kali ia disiksa.⁴⁹

VB1 menyampaikan kepada Komisi mengenai bibinya yang termasuk di antara orang-orang yang disiksa dan diperkosa. Bibinya tidak pernah membicarakan hal tersebut sampai ketika menjelang akhir hidupnya, ia menunjukkan kepada VB1 dan keluarganya bekas-bekas luka di sekujur tubuhnya akibat penyiksaan yang ia alami.⁵⁰

Menurut Zeferino Armando Ximenes, pada 1979 sejumlah prajurit dari Yonif 330 memerkosa seorang perempuan bernama WB di rumahnya ketika suaminya sedang dalam penahanan.⁵¹

Para saksi menyebut kesatuan-kesatuan ABRI berikut sebagai pelaku pemerkosaan: anggota-anggota Yonif 330, Yonif 745, satu kesatuan pasukan khusus yang dikenal dengan nama Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), Nanggala (nama sandi untuk satu kesatuan Kopassandha yang ditugaskan di Timor-Leste pada 1975-1983), Umi (salah satu dari empat kesatuan Nanggala yang ditugaskan di Timor-Leste yang dinamakan sesuai dengan sandi panggilan radionya), Batalion Artileri Medan (Yon Armed) 13, Polisi Militer (Pom), Brigade Mobil (Brimob) Polri, Brigade Infantri (terdiri atas tiga batalion), dan Hansip. Kesatuan-kesatuan yang ditugaskan di tempat-tempat penahanan asalnya bermacam-macam. Komandan ABRI pertama di Hotel Flamboyen adalah seorang komandan Kopassandha bernama Mayor PS68, sementara prajurit yang ditempatkan di sana berasal dari Yonif 330. Selain itu ada juga anggota-anggota Polisi Militer, Tim Umi, dan Hansip

di Hotel Flamboyan. Yonif 330 dan anggota-anggota Kopassandha dilaporkan ada di Rumah Merah. Anggota Kopassandha, Kodim, Koramil, dan Hansip pernah terlihat di Clubo Municipal. Yonif 745 (dari Lospalos) dan Batalion Artileri Medan 13 (dari Malang) ditugaskan di RTP-12. Hanya anggota Batalion Artileri Medan 13 yang ditugaskan di RTP 15 dan RTP 18 dan mereka tidak bercampur dengan pasukan dari kesatuan lain.

Anggota ABRI dan polisi berikut ini diidentifikasi oleh para korban dan saksi sebagai pelaku penyiksaan dan pemerkosaan di Baucau (yang menyebutkan nama-nama ini adalah saksi, bukan korban kekerasan seksual itu sendiri):

- Mayor PS68, komandan Kopassandha, pelaku penyiksaan dan pemerkosaan terhadap empat korban yang tercatat: XB, YB, ZB, dan UB (disebutkan oleh RJ, Marcelina Guterres, Florencia Martins Freitas, Santina de Jesus Soares Li);
- Kapten PS69, seorang bawahan Mayor PS68 [orang Indonesia], pelaku kekerasan terhadap satu korban yang tercatat (disebutkan oleh Florencia Martins Freitas);
- Prajurit Dua PS70, Yonif 330 [orang Indonesia], pelaku penyiksaan dan pemerkosaan terhadap dua orang korban yang tercatat: YB dan D (disebutkan oleh RJ);
- Prajurit Dua PS71, Yonif 330 [orang Indonesia], disebutkan sebagai pelaku pelanggaran terhadap dua orang korban penyiksaan dan pemerkosaan yang sama: YB dan D, dan sebagai pelaku penyiksaan dan pemerkosaan terhadap seorang korban tercatat: UB (disebutkan oleh RJ, disebutkan sebagai anggota Umi oleh Marcelina Guterres, Florencia Martins Freitas);
- Sersan Satu PS72, Yonif 330 [orang Indonesia], pelaku penyiksaan dan pemerkosaan terhadap dua orang korban tercatat: AC dan UB, dan sebagai pelaku penyiksaan terhadap dua orang korban tercatat: DC dan DS (disebutkan oleh Marcelina Guterres, RoRJ, Florencia Martins Freitas, Terezinha de Sa);
- Anggota Brimob Polri PS73 dan PS74 [orang Timor-Leste], pelaku penyiksaan terhadap satu orang korban tercatat yang menyebutkan mereka: VB2;
- Pembantu Letnan Satu PS75 [orang Indonesia], dari Polisi Militer, pelaku penyiksaan terhadap seorang korban tercatat: BR, dan pelaku pemerkosaan terhadap seorang korban tercatat: BC (disebutkan oleh Terezinha de Sa, Miguel António da Costa);

- Sersan Satu PS76 [orang Indonesia], anggota Polisi Militer (sudah meninggal), pelaku penyiksaan terhadap dua orang korban tercatat: BR dan DC, dan pelaku pemerkosaan terhadap satu orang korban tercatat: CC (disebutkan oleh Terezinha de Sa, Miguel António da Costa);
- Letnan Satu PS77 [orang Indonesia] dan anggota-anggota Batalion Artileri Medan 18, pelaku penyiksaan terhadap tiga orang korban tercatat: JG, LMG, dan T (disebutkan oleh Zeferino Armando Ximenes);
- PS78 [orang Timor-Leste], seorang informan dan pegawai Hotel Flamboyan (disebutkan oleh Florencia Martins Freitas)

Dampak dari penyiksaan yang dialami oleh para tahanan perempuan di Baucau berlanjut sepanjang hidup mereka. RJ, Terezinha de Sa, dan DC menderita masalah punggung akibat dipukul dengan balok kayu ketika disiksa. Rosa tidak lagi bisa berjalan secara normal. Kematian sedikitnya lima perempuan—UB, AC, Ana Maria Gusmão, Mafalda Lemos Soares, dan Palmira Peloi—mungkin berhubungan dengan penyiksaan yang mereka alami selama dalam penahanan.

D. Pemerkosaan lain

84. Seiring dengan semakin meluasnya kontrol militer Indonesia atas wilayah Timor-Leste, pemerkosaan tidak hanya terjadi di balik dinding militer yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Banyak orang Timor-Leste yang bekerja dengan tentara Indonesia, seperti anggota Hansip dan pegawai pemerintah, juga disebutkan sebagai pelaku pemerkosaan.

85. Peningkatan pemerkosaan yang dilakukan oleh personel nonmiliter dapat diartikan dengan cara yang berbeda-beda. Ini mungkin berkaitan dengan perluasan pasukan Hansip serta peningkatan perannya dalam membantu militer. Dapat juga berkaitan dengan impunitas yang dinikmati oleh anggota militer yang melakukan pemerkosaan pada tahun-tahun sebelumnya—bahwa militer dapat memerkosa tanpa dihukum mungkin saja telah mendorong laki-laki lain untuk melakukannya. Kesaksian dari beberapa korban yang mengalami pemerkosaan berulang menunjukkan bahwa pelaku pertama tidak hanya menikmati impunitas, tapi juga mendorong yang lainnya untuk melakukan kejahatan yang sama. Kasus-kasus berikut ini menunjukkan pola pemerkosaan di mana perempuan diteruskan oleh seorang pelaku kepada pelaku yang lain.

86. DC mengatakan bahwa pada 1976 ia diperkosa oleh PS79, Camat Lequidoe (Distrik Aileu), yang datang ke rumahnya dan mengancam akan membunuh ayah dan saudara-saudaranya jika ia tidak menuruti keinginannya. Karena pada waktu itu DC

adalah perawan, ia mengalami perdarahan ketika diperkosa dan selama satu minggu merasa sangat kesakitan. Beberapa bulan kemudian, PS79 mengirimkan empat tentara ABRI—PS80, PS81, PS82, dan PS83—ke rumah DC dan mereka memerkosanya. Menurut kesaksian DC, Camat ini juga memerkosa banyak perempuan lain.⁵²

87. EC mengungkapkan penangkapan dan pemerkosaan atas dirinya pada 1976 yang dilakukan oleh PS84, Komandan Koramil Hato Bulico, Ainaro (lihat bagian mengenai kekerasan seksual dalam Bab 7.8: Hak Anak). Setelah EC ditangkap oleh Komandan Koramil dan kepala desa Mulo (Hato Bulico, Ainaro) PS85, ia dibawa ke markas Kotis (Komando Taktis) di mana ia diinterogasi oleh anggota Hansip PS86 dan Komandan Koramil PS84. Kemudian EC ditelanjangi dan diperkosa, pertama oleh kepala desa PS85 dan kemudian oleh komandan PS84. Dalam keadaan telanjang, EC disuruh pulang. Ia harus bersembunyi sepanjang perjalanan ke rumah karena sangat malu. Beberapa hari kemudian anggota Hansip PS87 datang ke rumahnya. Ia baru kembali dari satu operasi yang dilancarkan di hutan, sehingga pada waktu itu ia membawa sepucuk senapan Mauser. PS87 membanting EC, menelanjanginya dan kemudian memanggil semua temannya anggota Hansip yang datang bersamanya untuk melihat EC. Ketika mereka melihatnya, mereka tertawa dan bersorak-sorai. Kemudian PS87 memerkosanya. Ia terus-menerus mengunjungi EC dan memerkosanya sampai ia menjadi hamil dan melahirkan seorang anak. Dalam kasus ini sikap komandan Koramil setempat adalah memberi “lampu hijau” kepada bawahannya, seorang anggota Hansip, untuk meniru perbuatannya dalam melanggar hukum dan adat-istiadat lokal. Kasus ini juga menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan yang tidak diberi sanksi sesuai hukum atas kejahatan mereka kemudian bisa menjadi pelaku kejahatan berulang (lihat bagian mengenai kekerasan seksual dalam Bab 7.8: Hak Anak).⁵³

88. Setelah anggota Hansip PS88 dan PS89 membunuh suami FC pada 1979, Hansip lainnya berulang kali memerkosa FC di Aiduk, Leolima (Hato-Udo, Ainaro). Pertama-tama, seorang Timor-Leste anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat I (DPRD I) yang bernama PS90 memerkosanya. Kemudian PS90 membawa dua orang anggota ABRI, PS381 dan PS382, dari Yonif 323 dan 125, untuk memerkosa FC lagi. Belakangan, PS90 mengundang keempat anaknya—PS91, PS92, PS93, dan PS94—untuk bergantian memerkosa FC.⁵⁴

89. GC diperkosa oleh Komandan Koramil Ainaro ketika ia menyerah di Bunaria (Ainaro, Ainaro) pada 1979. Setelah ia kembali ke rumahnya di Desa Soro (Ainaro, Ainaro), anggota Hansip dan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Soro yang bernama PS95 sering pergi ke sana dan memerkosanya. GC diperkosa sedikitnya dua kali oleh PS95, kemudian mengandung akibat pemerkosaan tersebut. Karena keadaan yang dialaminya, seorang pastor dan biarawati Katolik membawa GC tinggal di gereja. Pemerkosaan tersebut baru berhenti setelah ia pindah untuk tinggal dan bekerja di gereja.⁵⁵

90. HC dari Guruca (Quelicai, Baucau) memberi kesaksian kepada Komisi mengenai pemerkosaan beruntun yang ia alami. Karena takut terhadap serangan militer Indonesia, HC dan ibu angkatnya lari ke hutan pada 1977. Tahun 1978 HC,

bersama beberapa pengungsi lainnya, ditangkap oleh anggota ABRI dan Hansip dan dibawa ke Desa Abafala (Quelicai, Baucau). Ibu HC sudah meninggal di hutan dan saudara laki-laknya adalah seorang prajurit Falintil. Pada Desember 1979, HC dibawa oleh dua anggota Hansip dari Uaitame (Quelicai, Baucau) dan dibawa ke kantor desa Abafala yang juga dijadikan pos ABRI. Setibanya di pos itu, Hansip PS96 mendorong HC ke arah anggota-anggota tentara dan Hansip yang sedang tidur sambil berteriak, "Perempuan ini orang Fretilin. *Cuki* saja dia!" Mereka menyumbat mulutnya dengan kepalan tangan dan berkata, "Kalau kamu tidak mau, kami *cuki* kamu sampai mati!" HC kemudian diperkosa oleh PS96 di depan para anggota tentara dan Hansip yang berada di pos tersebut. Ia dibebaskan setelah pemerkosaan tersebut tetapi keesokan harinya Hansip PS96 membawanya kembali ke pos di mana ia kemudian diperkosa lagi. Pemerkosaan ini terjadi selama empat malam sampai seorang Hansip lain menegur PS96.⁵⁶

91. Pada 1991, satu kelompok bernama Sukarelawan,* yang di dalamnya termasuk PS97, PS98, PS99, dan PS100 [orang Timor-Leste] tiba di rumah IC di Cassa (Ainaro, Ainaro). Mereka datang untuk menangkap suami IC, tetapi karena sang suami sudah melarikan diri ke Dili, mereka mengambil IC. Mereka membawanya ke rumah PS98 di mana ia kemudian disiksa. Tangannya diikat dengan kabel bersama seorang korban perempuan lain yang tidak ia ketahui identitasnya. Mereka diinterogasi mengenai kegiatan-kegiatan Fretilin, terutama mengenai pemberian makanan kepada Fretilin. Selama interogasi anggota-anggota Sukarelawan menodongkan sebilah parang ke dada IC, memukulnya berkali-kali dengan popor senapan, dan meninju mukanya. Setelah dua hari dan dua malam para perempuan tersebut akhirnya dilepas. Akan tetapi, dua anggota Sukarelawan, PS99 dan PS100, mengikuti IC ke rumahnya dan memerkosanya di sana.⁵⁷

92. Pemerkosaan terhadap istri tahanan laki-laki, selain sebagai suatu pelanggaran yang dialami oleh perempuan itu sendiri, merupakan tekanan tambahan terhadap tahanan tersebut, yang bisa membuatnya pada akhirnya menghentikan perlawanan terhadap interogator. JC1 menyampaikan kepada Komisi tentang penahanan dan penyiksaan yang dialaminya dan juga pemerkosaan terhadap istrinya, JC. Pada 4 Oktober 1984, sekitar 20 orang tentara dan 10 Hansip dari Kodim Dili menahan JC1 dan dua saudara laki-laknya yang dicurigai memberikan makanan kepada Falintil. Pada saat itu ada lima orang laki-laki lain yang juga ditahan. Mereka diinterogasi dan disiksa di Kodim Dili dan kemudian dipindahkan ke kantor Sosial Politik (Sospol) Dili. Akhirnya, JC1 dan saudara-saudara laki-laknya ditahan di penjara Balide, Dili, selama tiga setengah tahun. Selama penahanannya, istri JC1 mengatakan kepadanya bahwa ia diperkosa empat kali oleh seorang tentara yang tidak diketahui namanya.

Saya dihukum penjara selama tiga tahun enam bulan. Saya menjalani selama tiga bulan penjara di Kodim [Dili] dan pada 4 Januari 1985

* Sukarelawan adalah kelompok prointegrasi yang dibentuk di Ainaro sekitar 1991 oleh Cancio Lopes de Carvalho yang kemudian mendapat dukungan dari ABRI. Anggota Sukarelawan di kemudian hari pada 1999 menjadi inti dari milisi Mahidi.

mereka memindahkan saya ke penjara Balide di Dili. Ketika dalam penjara Balide, istri saya mengunjungi saya dan memberi tahu saya bahwa ia telah diancam oleh anggota-anggota TNI [ABRI] dan diperkosa sebanyak empat kali. Ia tidak tahu nama-nama mereka.⁵⁸

Pemeriksaan di masa konsolidasi pendudukan (1985-1998)

93. Dengan banyaknya alasan kuat mengapa orang enggan mengungkapkan pengalaman pemeriksaan yang dialaminya, maka tingkat pelaporan yang rendah dapat diasumsikan terjadi dalam semua periode konflik. Asumsi ini membantu Komisi untuk membuat penilaian tentang pola-pola yang terjadi dalam seluruh periode konflik politik.

94. Dari pernyataan yang dikumpulkan Komisi, jumlah kasus pemeriksaan yang dilaporkan terjadi pada tahun-tahun awal pendudukan Indonesia berkisar antara 10-47 kasus per tahun. Tetapi, sesudah terjadi satu kenaikan tajam pada 1982 (tercatat 48 kasus tindak pemeriksaan dari pernyataan yang diambil) terdapat penurunan yang cukup banyak dalam jumlah kasus yang dilaporkan—hanya 2-17 kasus setahun—dari 1985 sampai 1988. Dua faktor mungkin menjadi sebab adanya penurunan ini: militer Indonesia yang mengurangi operasi besar-besaran, dan pemerintah sipil yang semakin berperan dalam kehidupan sehari-hari Timor-Leste. Pada periode ini, anggota kepolisian disebut oleh korban sebagai pelaku pemeriksaan. Ini menunjukkan peran polisi yang semakin meningkat dalam menjaga keamanan. Juga dalam periode ini keluarga-keluarga korban mulai mencari penyelesaian hukum untuk pemeriksaan yang terjadi walaupun, karena pelaku jarang diproses hukum, proses peradilan tidak memberikan keadilan yang nyata kepada korban. Pemeriksaan berlanjut sepanjang akhir dasawarsa 1980-an dan terus sepanjang 1998, tetapi pada tingkat yang lebih rendah dibanding tahun-tahun awal pendudukan.

A. Pemeriksaan dalam tahanan

95. Walaupun kehidupan sehari-hari selama masa ini menjadi semakin normal, militer masih tetap menahan dan menyiksa dengan sewenang-wenang orang-orang yang dicurigai mendukung kemerdekaan. Perempuan ditahan karena mereka dicurigai mendukung kemerdekaan atau karena suami, saudara laki-laki, atau anggota keluarga mereka lainnya dicurigai terlibat dalam Resistansi. Hampir sepuluh persen dari seluruh perempuan yang ditahan dalam periode ini pernah diperkosa setidaknya satu kali selama dalam tahanan; banyak yang diperkosa berkali-kali.

96. KC1 memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai perekrutan secara paksa dan pemeriksaan terhadap istrinya, KC, pada 1989 di Mehara (Tutuala, Lautém). Karena KC1 adalah seorang gerilyawan Fretilin/Falintil di hutan, KC dipaksa oleh pasukan paramiliter Halilintar* untuk mengambil bagian dalam operasi militer

* Dalam kasus ini, Halilintar di Lautém pada 1989 adalah satu kesatuan pasukan ABRI dan bukan kelompok milisi yang aktif di Distrik Bobonaro.

selama dua bulan. Dalam masa ini ia diperkosa oleh anggota-anggota pasukan itu dan menjadi hamil sebagai akibatnya. PS101, seorang TBO (Tenaga Bantuan Operasi) yang pada waktu itu bersama dengan pasukan tersebut, belakangan memberitahu KC1 bahwa pada 30 September 1989 ia menyaksikan sendiri tentara dari Yonif 144 di bawah komando Kapten PS102 [orang Indonesia], menikam dada KC dengan bayonet, yang menyebabkan kematiannya.⁵⁹

97. Dua orang perempuan bersaudara, LC dan MC, diculik bersama dengan ayah mereka di Ermera pada 1994. Lima belas anggota ABRI, yang hanya empat di antaranya dikenali oleh kedua perempuan ini, membawa mereka ke Koramil di Atsabe (Ermera). MC mengisahkan kepada Komisi:

Pada 1984, tentara [orang Timor-Leste] bernama PS103, PS104, PS105, dan PS106, bersama dengan 11 orang tentara Indonesia, menahan saya, ayah saya..., dan adik perempuan saya LC, di Lasaun [Atsabe, Ermera]. Mereka membawa saya ke Koramil Atsabe; di sana kami dipisahkan satu sama lain. Ayah saya dimasukkan ke dalam satu ruangan, sedang saya dan adik saya di ruang lain. Tentara orang Timor maupun Indonesia memukuli dan menendangi kami. Mereka merendam sepatu larsnya dalam air dan menendang kami. Mereka memasukkan senjatanya ke dalam mulut kami, meminta keterangan. Mereka menelanjangi adik saya dan saya, menutup mata kami, dan memasukkan kami ke dalam tangki air dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Mereka lakukan lagi hal ini dari tengah malam sampai pukul 2 pagi. Setelah itu mereka masukkan kami ke dalam lubang untuk membunuh kami malam itu, tetapi tidak jadi dan kami dibawa kembali ke tempat tahanan. Tentara itu, baik yang orang Indonesia maupun Timor, memerkosanya adik saya secara berpasangan. Saya tidak tahu lagi berapa [prajurit yang memerkosanya] karena begitu banyak. Ini berlangsung terus selama empat hari.⁶⁰

98. NC ditahan pada 24 Januari 1996 di Kodim 1636 Maliana. Di sana ia diancam dengan senjata, disetrum, dan diharuskan tidur di lantai yang basah. Anggota-anggota Satuan Gabungan Intelijen (SGI) memerkosanya NC yang matanya ditutup dan tangan serta kakinya diikat. Setelah beberapa minggu ia dilepas, tetapi harus melapor ke Kodim setiap hari selama setahun.⁶¹

99. Pada 10 Februari 1996 sepuluh orang Timor-Leste yang menjadi tentara Indonesia menangkap OC dan PC di kampung mereka di Raiheu (Cailaco, Bobonaro) dan membawa mereka ke Koramil Bobonaro. Mereka ditahan di sel yang terpisah di Koramil Bobonaro di mana mereka disiksa, diinterogasi, dan mengalami pemerkosaan berkali-kali:

Pada 10 Februari 1996 kira-kira pukul 6 pagi di Aldeia Bada Lesumali, Raiheu [subdistrik Cailaco, Distrik Bobonaro], sepuluh orang Timor tentara Indonesia menangkap saya dan teman saya, PC. Saya hanya tahu nama satu orang saja—PS107. Pada waktu ditangkap kami

tidak disiksa, tetapi dibawa ke Koramil Bobonaro dan dimasukkan ke dalam sel yang terpisah. Setelah itu saya diinterogasi oleh seorang tentara mengenai hubungan saya dengan Falintil. Karena saya tidak mau berterus terang, lima orang tentara Timor menempeling saya dua kali dan menendang saya dengan sepatu lars empat kali. Mereka menaruh kursi di atas jari kaki kiri saya dan kemudian duduk di kursi itu sampai jari kaki saya berdarah. Kemudian saya dimasukkan ke dalam sebuah kamar yang kecil sampai esok paginya.

Pada 12 Februari 1996 sekitar pukul 7 malam lima orang tentara Indonesia memasuki sel saya. Mereka mengancam saya, membanting saya ke lantai, menelanjangi saya, dan memerkosa saya. Dalam kegelapan mereka berganti-ganti memerkosa saya selama tiga jam. Ketika saya diperkosa ABRI, umur saya 20 tahun. Malam itu juga teman saya PC diperkosa oleh ABRI, tetapi saya tidak tahu pada waktu itu. Baru kemudian PC memberi tahu saya.

Pada 13 Februari 1996 Komandan Koramil Bobonaro menyerahkan kami berdua ke Kodim 1637 Bobonaro [di Maliana] di mana kami diserahkan ke komandannya. Sekali lagi kami dipisahkan dan dimasukkan ke dalam sel yang gelap. Saya diinterogasi oleh dua orang ABRI yang sedang jaga di Kodim. Selama interogasi ini mereka membuka baju saya kecuali celana dalam saya, menyetrum saya, dan menyunduti puting susu saya dengan rokok. Mereka menciumi dan mencumbui saya setelah mereka mendorong saya ke tembok untuk memerkosa saya, tetapi tidak jadi karena mereka melihat darah [menstruasi] di celana dalam saya.

Pada 12 Februari 1998, tiga orang anggota pasukan Rajawali datang ke sel saya dan mengikat kedua tangan saya. [Mereka membawa saya ke luar,] mengancam saya dan mendorong saya ke sebuah pohon di dekat tempat tahanan. Mereka mengangkat rok saya dan memerkosa saya dalam keadaan berdiri. Hari itu juga mereka melepas saya dan menyuruh saya pulang.⁶²

100. Selama periode ini, pelaku-pelaku pemerkosaan dalam penahanan bukan saja anggota ABRI, tetapi juga anggota-anggota kepolisian. Walaupun kasus pemerkosaan oleh polisi lebih sedikit jumlahnya dibandingkan kasus pemerkosaan oleh tentara, perlakuan terhadap tahanan perempuan oleh polisi sama dengan perlakuan oleh militer, terutama terhadap perempuan yang dicurigai terlibat dalam organisasi pro-kemerdekaan.

101. Pada 1993, tiga orang perempuan bernama QC1, QC2, dan QC sedang berjalan pulang dari pertemuan dengan anggota-anggota Falintil in Atsabe (Ermera). Dua orang Timor-Leste petugas intelijen, PS108 dan PS109, menyergap mereka dan berusaha memerkosa mereka. Seorang anggota Falintil, PS325, berhasil mencegah serangan ini dengan cara menikam PS108. Ketiga perempuan itu lari, tetapi seminggu kemudian mereka ditangkap lagi dan dibawa ke kantor polisi di Atsabe di mana mereka disiksa. Seorang anggota polisi, PS110, membawa QC ke sebuah

ruangan yang kosong, menelanjinginya dan memerkosanya. QC mengalami sakit yang sangat parah selama tiga hari. Setelah tiga hari mereka dipindahkan ke kantor polisi tingkat distrik di Gleno (Ermera) di mana mereka ditahan selama seminggu. Kemudian mereka dikirimkan kembali ke kantor polisi di Atsabe di mana mereka ditahan selama sebulan. QC pada waktu itu baru berusia 15 tahun.⁶³

B. Pemerksaan tanpa proses hukum

102. Pengadilan Indonesia mulai berfungsi di Timor-Leste tahun 1977. Tetapi sampai dasawarsa 1990-an sistem peradilan resmi ini masih tidak membantu korban pemerksaan dan keluarga mereka yang berusaha menggunakannya untuk mendapatkan keadilan. Kebanyakan korban merasa bahwa melaporkan pemerksaan yang mereka alami itu tidak ada gunanya dan bahkan berbahaya. Mereka yang mencari penyelesaian hukum untuk pelanggaran yang mereka alami hanya mendapatkan sedikit bantuan.

103. Pada 4 April 1992 RC dari Fatuletu (Zumalai, Covalima) diperksa oleh seorang anggota Hansip bernama PS111. Seperti diungkapkan oleh saudara perempuannya, RC1, keluarga RC melaporkan kasus ini kepada komandan Koramil di Zumalai, tetapi tanpa hasil:

PS111 datang dan mengancam kami dengan senapan. Ia melepaskan tembakan ke udara tiga kali. Kami semua ketakutan...Ia datang untuk memaksa adik perempuan saya, RC, melakukan hubungan seks dengannya. Karena adik saya takut, ia memerksanya. Walaupun PS111 adalah anggota Hansip dan pamong desa yang kami tahu sudah kawin, ia ingin memaksa adik saya untuk menjadi gundiknya, tetapi karena ia menolak ia mengancamnya dengan senjata dan memerksanya. Kami melaporkan kasus ini kepada komandan Koramil, tetapi ia diam saja. Kemudian ia mengatakan kepada kami agar menyelesaikan perkara ini dengan cara adat. Tetapi ini tidak terjadi. PS111 hanya mengatakan dengan gaya yang mengancam, "Ini adalah hukum senjata. Kami bebas memerksa pendukung Fretilin." Adik saya RC meninggal tahun 1999.⁶⁴

104. SC diperksa pada 1995 oleh seorang petugas kepolisian yang dikenalnya dengan nama PS396 di Soibada (Distrik Manatuto). Petugas kepolisian itu masuk ke rumahnya di tengah malam dan lari ketika orangtua SC masuk ke kamar itu. Walaupun ini jelas merupakan suatu kejahatan dalam hukum Indonesia, komandan polisi yang menyelidiki kasus ini hanya memukul polisi yang memerksa SC dan mengharuskannya membayar ganti rugi dalam jumlah yang tidak besar. Perlakuan komandan ini menunjukkan bahwa pelaku memang melakukan pelanggaran; namun ia tidak ditangkap untuk diproses secara hukum. Menurut kesaksian SC:

Ia menutup mulut saya hingga saya tidak bisa berteriak, lalu ia menelanjangi dan memerksa saya. Saat kejadian itu saya menangis, sehingga ketahuan orangtua saya. PS396 lari keluar melompati pagar

depan rumah menuju kantor polisi. Orangtua saya memukuli saya dan kemudian melaporkan kejadian itu pada Kapolsek [Kepala Kepolisian Sektor]. Kapolsek datang bersama anak buahnya ke rumah saya, dan memukuli PS396 di depan orangtua saya. Kemudian ia memotong rambutnya sampai botak dan menyuruhnya membayar denda sebesar Rp200.000. Setelah itu ia dipindahkan ke Manatuto.⁶⁵

105. Pada 5 November 1996, TC dari Desa Lisapat (Hatolia, Ermera) ditangkap bersama dengan tujuh orang anggota keluarganya di Atabae (Ermera). Karena dicurigai menyembunyikan gerilyawan Falintil, mereka dibawa ke Koramil di Ermera. Di sana mereka ditahan selama kira-kira dua minggu. Kemudian mereka ditahan dua minggu lagi di pos Kostrad/Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat (Rajawali II)* di Lulirema (Ermera). Selama TC dalam tahanan, prajurit-prajurit berkali-kali memerkosanya dan memaksanya melakukan pekerjaan rumahtangga. Kejadian ini akhirnya diketahui oleh petugas gereja setempat yang berhasil membela TC agar dibebaskan. Kasus ini dilaporkan kepada pekerja-pekerja hak asasi manusia di Dili dan Jakarta. Dalam sebuah submisi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia pada 22 Januari 1997, koalisi organisasi-organisasi nonpemerintah di Jakarta memberikan perincian kasus ini:

Pada kira-kira tengah malam, TC dilepaskan dari tiang bendera itu dan dibawa ke markas Koramil dengan tangannya masih diborgol. Ia dimasukkan ke ruangan sendirian...Selama ia di sana, ia tetap diborgol kecuali jika makan atau ke kamar kecil. Suatu hari (tanggal tidak diketahui korban) pada kira-kira tengah malam, ketika sedang sangat sepi, tiba-tiba lampu di kamarnya dimatikan dari luar. Dalam kegelapan, seorang tentara yang tidak dapat dikenalnya memasuki kamarnya. Ia memeluknya sambil mengancamnya agar tidak menjerit. "Kalau kamu menjerit ini salahmu sendiri. Saya akan bawa kamu ke luar malam ini juga dan membunuh kamu di hutan. Jika besok kamu kasih tahu komandan saya, saya akan bunuh kamu pada malam berikutnya," katanya. Dengan tangannya masih diborgol, TC diperkosa sampai ia tidak sadarkan diri lagi...

Pada pertengahan November 1996 para tahanan dibawa ke pos komando Rajawali II di Lulirema. Di pos komando ini ada 50-100 orang tentara. Mereka ditahan di sana selama dua minggu. Pada minggu pertama, TC diperkosa dua kali. Pemerkosan terjadi pada malam hari sedang tangannya masih diborgol. Nama pelaku tidak diketahuinya, tetapi ia tahu bahwa pangkatnya siku kuning tiga (sersan kepala), kulitnya hitam, tubuhnya tinggi dan rambutnya

.....
* Rajawali adalah nama sandi satu kesatuan Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat (Kostrad) yang ditugaskan di Timor-Leste pada pertengahan dasawarsa 1990-an. Sebelumnya istilah ini digunakan untuk menyebut Kopassus. Semua kasus dalam bab ini di mana Rajawali disebut sebagai pelaku, yang dimaksud adalah anggota Kostrad.

lurus...Pada minggu kedua borgolnya dilepas. Pelaku yang itu juga memerkosanya dua kali lagi. Ketika ditahan di pos militer itu, TC juga dipaksa memasak air dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain...⁶⁶

106. TC dibebaskan sesudah intervensi seorang katekis.* TC membuat laporan ke Polisi Militer di Balide (Dili) dengan bantuan dua orang pengacara dari Yayasan HAK, organisasi nonpemerintah bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia, yang didukung oleh pengacara senior dari Jakarta dan Kupang. Salah seorang pengacara tersebut, Rui Pereira dos Santos, menjelaskan:

Proses investigasi makan waktu lama. Halangan utama adalah orang yang melakukan kejahatan-kejahatan di pos Rajawali di Ermera itu telah kembali ke pangkalannya [di luar Timor-Leste]. Itulah... sebabnya ia tidak dapat dibawa ke [markas] Polisi Militer di Dili untuk diselidiki. Ketika penelitian telah selesai kami mengirimkan berkas-berkas kepada Komandan Korem dengan salinan kepada Pengadilan Tinggi Militer di Jakarta, Panglima ABRI, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung di Jakarta. Pada akhirnya saya mendengar bahwa tuntutan selesai dilakukan di Jakarta, tetapi tuduhannya diubah dari pemerkosaan menjadi hubungan seks antara orang-orang yang sama-sama mau [tuduhan yang lebih ringan]. Mereka juga menghilangkan samasekali kata-kata bahwa TC melakukan pekerjaan rumahtangga. Saya dengar pelakunya dijatuhi hukuman enam bulan, tetapi sebagai pengacara TC saya tidak pernah menerima salinan keputusan itu. Selama proses penyelidikan itu, TC telah tiga atau empat bulan hamil.⁶⁷

107. Pada 9 Januari 1997, UC ditangkap bersama UC1, di Desa Babulo (Uatolari, Viqueque) karena mereka terlibat menyelundupkan peluru untuk Falintil. Mereka dibawa ke kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Uatolari, kemudian dipindahkan ke kantor Kepolisian Resort (Polres) 1134 di Kota Viqueque. UC mengisahkan kejadian-kejadian sesudahnya:

Setibanya kami di sana, mereka menahan kami terpisah. Malamnya mereka memanggil saya untuk diinterogasi kemudian mengembalikan saya ke sel. Malam itu juga seorang anggota polisi bernama PS112, yang berasal dari Kupang, datang ke sel saya dan memerkosa saya sampai pagi. Tanggal 11 Januari 1997 seorang polisi lain bernama PS396 datang ke sel saya dan kembali saya diperkosa sampai pagi.⁶⁸

.....
* Katekis adalah orang awam dalam Gereja Katolik yang bertugas memberikan pelajaran dan bimbingan agama mengenai liturgi, mempersiapkan keluarga untuk permandian anak-anak mereka, mempersiapkan anak-anak untuk menerima komuni, dan tugas-tugas sejenisnya. Di Timor-Leste hampir di setiap desa ada katekis.

108. Sesudah interogasi yang dialaminya, UC dibebaskan dan dipanggil kembali pada 23 Agustus 1997 untuk menjalani proses pengadilan. UC mendapatkan bantuan hukum dari Yayasan HAK selama proses pengadilannya dan menyampaikan kepada pengacaranya pemerksosaan yang dialaminya dalam tahanan. Ia terlalu takut untuk pergi bersama pengacaranya melaporkan kejadian ini kepada Polisi Militer, sehingga pengacaranya melaporkan kejahatan tersebut dengan menggunakan kuasa hukum yang telah diterimanya. Mereka juga menyampaikan laporan tersebut kepada oditur militer tingkat provinsi. Tetapi, menurut pengacaranya, tidak ada tanggapan yang berarti. Kasus itu “dipeti-eskan”.⁶⁹

C. Pemerksosaan di dalam dan di sekitar rumah korban

109. Sebagaimana halnya dengan kasus-kasus kekerasan seksual pada umumnya, jumlah kasus pemerksosaan yang dilaporkan, termasuk pemerksosaan dalam penahanan, menurun cukup banyak dari 1985 sampai 1998. Meskipun demikian, perempuan tetap saja menghadapi risiko kekerasan seksual. Ini terutama jelas dalam kasus-kasus pemerksosaan yang terjadi di wilayah yang secara tradisional dianggap sebagai wilayah perempuan: di dalam atau sekitar rumah, di kebun, dan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

110. Pada 1989 VC berumur 15 tahun ketika Prajurit Satu PS113 dari kesatuan Armed (Artilleri Medan) 9 datang ke rumahnya di Ililapa, Lore II (Lospalos, Lautém) dan menuntut VC menjadi “istri”-nya. Menurut VC, yang dimaksud PS113 adalah agar dapat berhubungan seks dengannya dan didampingi VC ke pesta-pesta. VC menolak. PS113 mengancamnya dengan senjata, kemudian menyeretnya ke kamar tidur dan memerksosanya. Akibat pemerksosaan ini VC menjadi hamil tetapi tetap pergi ke sekolah. PS113 dipindahkan ke Laga (Baucau). Kemudian, ia muncul lagi, dan kali ini sambil mengancam dengan granat, ia berusaha memaksa VC pergi mengikutinya ke Laga. VC berhasil meloloskan diri.⁷⁰

111. PS114 adalah kepala *aldeia* Talo, Hatolia (Hatolia, Ermera). Karena hubungan dekatnya dengan Yonif 744, PS114 dapat melakukan pemerksosaan berkali-kali tanpa dihukum. Pada Maret 1989, ia berkali-kali memerksosa WC yang berumur 14 tahun. Kepada Komisi WC mengungkapkan kejadiannya:

PS114 tiba-tiba masuk, membuka pakaian saya, duduk di atas saya dan memerksosa saya empat kali malam itu. Ia memberi ibu saya Rp30.000...Di mana saja ia bertemu dengan saya sendirian di jalan, ia menarik saya ke kebun kopi, menelanjangi saya dan memerksosa saya. Ia bahkan membawa seorang Indonesia bernama PS115, pengawas perkebunan kopi PT Salazar di Talo. PS115 memanggil saya ke jalan, menarik saya dan memerksosa saya. Ketika saya sampai di rumah, PS114 memerksosa saya lagi. Saya merasa seperti saya ini binatang. PS114 memerksosa saya berkali-kali, di jalan, di kebun kopi, di mana saja...sampai saya menjadi hamil, kemudian ia tidak pernah mengakui anaknya.⁷¹

112. XC adalah korban lain dari pelaku yang sama, enam tahun kemudian. Ia diperkosa di rumahnya di Talo pada 1995. Dalam kesaksiannya, XC mengatakan bahwa PS114 diketahui mempunyai hubungan baik dengan Yonif 744 dan ia takut dibunuh jika menolak kemauannya.⁷²

113. Juga di *aldeia* Talo, seorang anggota tentara dari Yonif 726 memerkosa YC. Pada 12 Juli 1989 empat orang prajurit yang bersenjata dan memakai seragam tentara mengepung rumah YC. Pada waktu itu ayah dan saudara laki-lakinya tidak di rumah. Seorang anggota tentara memasuki rumahnya dan memerkosanya.⁷³

114. Suami ZC, seorang anggota Falintil, sedang melakukan pertemuan dengan seorang komandan Falintil bernama Mauhunu dan Adjunto Mera Putar ketika ketiganya disergap oleh tentara Indonesia dalam operasi gabungan Yonif 142, Kodim Ainaro, dan anggota-anggota Milsas.* Karena suaminya berhasil meloloskan diri, ZC menjadi pengganti sasaran kekerasan mereka. Ia diambil dari rumahnya pada hari itu juga:

Pada 8 November 1991, Sukarelawan, dipimpin oleh PS98, datang ke rumah saya, bersama dua anggotanya PS116 dan PS117. Mereka tanyakan di mana suami saya. Saya menyatakan bahwa suami saya sedang ke luar bekerja di sebuah proyek. Lalu mereka membawa saya ke tempat yang bernama Balai Pro-Integrasi dan saya diinterogasi di sana. Saya dituduh memberikan makanan kepada Falintil. Saya menyatakan tidak tahu apa-apa. Dua hari kemudian, anggota-anggota Sukarelawan mengikat saya bersama dengan 14 laki-laki dan perempuan lain. Sesudah satu malam, PS98 dan Sersan Dua PS118, seorang anggota Koramil, melepaskan tali dari tangan kami dan kami dipaksa menandatangani surat pernyataan...Sebelum itu, kami dipaksa minum tuak Sabu untuk upacara sumpah [kesetiaan kepada Indonesia]. Kami dipaksa bersumpah pada November 1991. Setelah bersumpah, kami dipaksa dansa dengan PS98 dan anggota-anggota milsas sampai pagi. Suatu malam, Sukarelawan masuk rumah saya dengan membawa pisau, senapan AR 16, FNC, SKS, dan pedang samurai. PS119 menyuruh bapak mertua saya untuk keluar membeli rokok. Lalu saya ditariknya ke dalam kamar dan pakaian saya ia buka secara paksa, lalu saya diperkosa...Seorang Sukarelawan lain, PS120, memerkosa saya satu kali.⁷⁴

* Militerisasi atau *milsas* adalah proses perekrutan dan pelatihan militer penduduk sipil yang dimulai oleh Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat (Kostrad) pada 1989. Anggota-anggota kelompok sipil seperti Hansip (Pertahanan Sipil), Wanra (Perlawanan Rakyat), dan Ratih (Rakyat Terlatih) dikirim dari Timor-Leste ke Bali atau Malang (Jawa Timur) untuk menjalani latihan kemiliteran selama tiga bulan. Setelah menyelesaikan latihan ini mereka resmi menjadi anggota Angkatan Darat. Baik latihan kemiliteran itu sendiri maupun orang Timor-Leste yang menjalani latihan ini oleh penduduk sering disebut Milsas atau kadang-kadang "tentara tiga bulan". [Lihat Bagian 4: Rezim Pendudukan untuk perincian mengenai program milsas di Timor-Leste].

115. Perempuan bukan hanya diperkosa setelah diambil dari rumah mereka. AD diperkosa di warung dekat rumahnya di Laleia, Manatuto. Pada 1994, saat ia pergi ke warung itu untuk membeli biskuit, sekelompok tentara—PS123, PS124, PS125, dan beberapa orang lain—memaksa AD masuk ke warung. PS123 memerkosanya sementara prajurit-prajurit yang lain berjaga di pintu masuk. PS123 mengancam akan membunuh AD jika ia menjerit.⁷⁵

116. BD1 dari Aidaba Leten (Atabae, Bobonaro) memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai pemerkosaan terhadap istrinya, BD. Pada 1996 BD1 ditangkap di Aidaba Leten dan disiksa oleh milisi Halilintar di pos SGI, yang terletak di rumah PS126. Setahun kemudian, ketika itu BD1 telah melarikan diri ke hutan, kelompok milisi yang sama, termasuk PS127, PS128, PS129, PS130, PS131, dan PS132, datang ke rumahnya, pada saat istrinya tinggal di rumah. Mereka mengancam akan membunuh semua keluarga BD jika ia tidak menyerahkan diri. Akhirnya, PS130 memerkosa BD di rumahnya sendiri.⁷⁶

117. Pada Desember 1996 CD menyaksikan anggota-anggota Rajawali menggeledah rumahnya di Desa Batu Manu (Atsabe, Ermera) setelah menerima informasi bahwa ia terlibat dalam kegiatan bawahanah. CD, saudara laki-lakinya, ayahnya, bersama dengan dua orang laki-laki lain, CD1 dan CD2, diikat dan dipukuli. Di tengah malam mereka disuruh mencari seorang laki-laki bernama Mateus yang katanya pergi ke hutan untuk mengantarkan granat. CD harus mendaki bukit dan menyeberangi sungai. Dua orang anggota Rajawali memerkosanya di hadapan CD1.⁷⁷

118. E1 aktif dalam gerakan klandestin. Pada Agustus 1997 saudara perempuannya E diambil dari rumahnya oleh PS113, seorang Timor-Leste petugas Babinsa, bersama dengan tiga orang Timor-Leste anggota ABRI—PS134, PS135, dan PS136. Ia dibawa ke kantor desa Betulau (Liquidoe, Aileu) di mana E1 sedang diinterogasi. Di sana, E diperkosa oleh PS133 dan seorang anggota milisi lain. E merahasiakan hal ini dan ketika menjelang meninggal baru ia menceritakannya kepada saudara laki-lakinya.⁷⁸

119. DD1 memberikan kesaksian kepada Komisi tentang pemerkosaan terhadap saudara perempuannya, DD, pada 1998 di Desa Laulana (Letefoho, Ermera). Anggota-anggota BTT 711 secara bergiliran memerkosanya di rumahnya sendiri. Karena dicurigai memasak untuk Falintil, DD dipaksa masuk ke dapur oleh tiga orang tentara, salah satunya seorang Indonesia bernama PS137. Di dapur itu ia diperkosa di depan saudara laki-lakinya.⁷⁹

Kesaksian dan bukti dari Mário Viegas Carrascalão tentang kekerasan terhadap perempuan dari 1982 sampai dengan 1992

Dalam submisi tertulisnya kepada Komisi, Mário Viegas Carrascalão, Gubernur Provinsi Timor Timur dari 1982 sampai dengan 1992 mengidentifikasi empat kelompok pelaku kekerasan terhadap perempuan.

“1) **Tentara Indonesia** [yang melakukan kekerasan terhadap perempuan] secara terorganisasi dan sistematis, korbannya umumnya adalah sasaran yang mudah, karena mereka akan kehilangan nyawa, atau keluarga mereka akan kehilangan nyawa kalau menolak kemauan pelaku. Ada kesaksian-kesaksian tentang dilakukannya penembakan senjata [oleh anggota tentara] untuk mencapai tujuan mereka. Korban meliputi:

- a. Perempuan keluarga dekat anggota gerakan resistansi yang terbunuh dalam pertempuran, misalnya janda dan/atau anak perempuan mereka, juga adik/kakak, bibi, dan saudara sepupu;
- b. Istri dan/atau anak perempuan orang-orang yang ditahan dengan tuduhan mendukung Resistansi;
- c. Istri dan/atau anak perempuan orang-orang yang masih punya keluarga “di hutan” meskipun tidak aktif [dalam Resistansi];
- d. Tahanan perempuan [yang ditahan] karena melakukan perbuatan kriminal dan tahanan politik perempuan;
- e. Anak perempuan dari perempuan Timor-Leste dengan laki-laki Portugis yang tinggal di luar negeri, atau keturunan mereka;
- f. Anak perempuan cantik penduduk desa biasa, yang ditawarkan kepada tentara oleh keluarga mereka sendiri untuk mendapatkan kemudahan; di sejumlah tempat Timor-Leste praktik ini telah digunakan di masa kolonial;
- g. Perempuan muda yang tinggal di “Desa Binaan” yang jelas merupakan kamp konsentrasi.

“Dalam kasus-kasus ini (a sampai g), [metode] yang sering digunakan adalah ancaman, penipuan, jebakan, dan teror. Para pelaku adalah tentara yang bertugas teritorial (dari Korem, Kodim, Koramil, bintanga angkatan darat dan kepolisian yang bertugas di desa). Perempuan yang dijadikan ‘hadiah’ diberikan oleh bawahan kepada atasan mereka ketika melakukan kunjungan kerja. Ini adalah cara yang digunakan oleh bawahan untuk mendapatkan perhatian dari atasan dan dengan demikian mendapatkan promosi karier yang cepat.

“2) Orang Timor-Leste dalam struktur militer kekuasaan pendudukan sebagai informan, anggota kelompok paramiliter atau Hansip, atau yang dijadikan bagian dari tentara reguler. Pelaku ini melakukan kekerasan terutama terhadap golongan masyarakat yang paling sederhana dan miskin. Metode yang mereka gunakan biasanya adalah teror, ancaman dilaporkan kepada intelijen, jebakan, fitnah, dan datang pada malam hari ke rumah korban (sendirian atau bersama anggota-anggota “Intel” atau personel militer lain, yang dalam sejumlah kasus berpakaian ninja seperti di Dili). Mereka juga menjadi penghubung antara tentara Indonesia dan korban orang setempat yang digunakan untuk melayani atasan mereka.

“3) Orang sipil, dari Timor-Leste maupun luar, yang berkedudukan penting di semua tingkat pemerintahan. Golongan ini menggunakan kedudukan mereka dalam administrasi negara untuk “memperlancar” prosedur birokratis bagi korban mereka (gadis, janda, atau perempuan yang bersuami) yang, misalnya, memerlukan izin usaha, mempercepat pengurusan pensiun yang merupakan hak mereka karena suami yang sudah meninggal adalah pegawai negeri, atau...kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan tender proyek-proyek pembangunan. Sebagai imbalannya mereka [orang-orang sipil ini] meminta dipuaskan nafsu seksualnya.

“4) Orang Timor-Leste dan orang luar guru sekolah dasar. Pada 1983, ketika sistem pendidikan wajib mulai berlaku di Timor-Leste, bukan hanya anak-anak berumur enam tahun yang mulai masuk sekolah, tetapi juga pemuda berusia 16 dan 17 tahun. Karena jumlah orang Timor-Leste yang menjadi guru sedikit, direkrut banyak guru Indonesia. Hanya guru laki-laki, baik yang lajang maupun sudah menikah (tetapi kalau sudah menikah, istri mereka tetap tinggal di Indonesia), yang dikirimkan ke Timor-Leste. Orang Timor-Leste yang direkrut untuk mengajar pada sekolah dasar kebanyakan juga laki-laki, berusia muda—baru saja menyelesaikan pendidikannya—dan lajang atau sudah menikah. Jika sudah menikah, istri tidak boleh ikut ke desa-desa bersama mereka. Akibat keadaan ini sampai pada pemerintah berupa laporan-laporan mengenai keterlibatan “bapak-bapak” atau guru orang Timor-Leste dengan murid-murid perempuan. Kasus yang paling banyak dilaporkan terjadi di Distrik Covalima, Maliana, Liquiçá, dan Baucau. Di Baucau, seorang guru dari Indonesia memerkosa 22 murid perempuannya. Kasus ini diajukan ke pengadilan dan pemerkosanya hanya dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara. Laki-laki ini akhirnya dikembalikan ke kota asalnya tanpa menyelesaikan hukuman penjaranya.

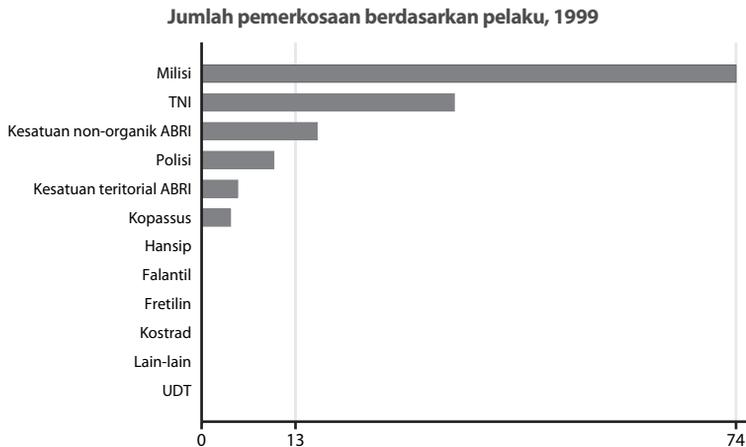
“Tidak semua pelaku dihukum untuk pelanggaran yang mereka lakukan karena Gubernur, menurut hukum Indonesia, tidak

bisa menghukum tentara, polisi, bupati, dan lain-lain. Karena itu maksimum yang bisa dilakukannya terhadap orang-orang itu adalah melakukan penyelidikan dan, jika mungkin, mendesakkan dilakukannya tindakan kepada departemen-departemen tempat mereka bekerja dan yang bisa mengambil tindakan.”⁸⁰

Mário Carrascalão juga menyebutkan tindakan yang dilakukannya mengenai sejumlah kasus-kasus pemerkosaan, baik dengan mengirimkan surat pengaduan kepada komandan militer atau dengan berbicara kepada pejabat-pejabat pemerintah dan militer Indonesia di Jakarta. Mário Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa ia tidak pernah menerima jawaban resmi untuk laporan-laporannya mengenai kekerasan seksual.

Pemerkosaan dan Jajak Pendapat

120. Data yang dikumpulkan oleh Komisi menunjukkan peningkatan tajam kasus pemerkosaan yang dilaporkan terjadi pada 1999 dengan puncaknya pada April dan September 1999. Dari pemerkosaan yang dilaporkan terjadi tahun itu, 19% (20/105) dilakukan oleh anggota-anggota militer.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali, karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara beberapa pelaku

A. Pemerksaan sebelum Jajak Pendapat (April-Agustus 1999)

121. Pemerksaan terjadi sebagai bagian dari kekerasan yang menyebar di seluruh wilayah ini sebelum Jajak Pendapat pada Agustus 1999. Insiden pemerksaan mencapai puncaknya pada April dan Mei, sebelum pemungutan suara, di hampir semua distrik. Ini terjadi bersamaan waktunya dengan gelombang perpindahan penduduk yang disebabkan oleh pembakaran rumah dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya di seluruh Timor-Leste.

122. Sekali lagi perempuan sering menjadi korban kekerasan pengganti (*proxy violence*)—anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia dan milisi yang berada di bawah kendali mereka memerkosa istri, saudara-saudara perempuan, dan anak-anak perempuan dari laki-laki yang sudah tidak berada di tempat, yang hendak mereka bunuh karena mendukung gerakan kemerdekaan.⁸¹

123. Pengalaman DE adalah contoh dari pola ini. DE diserang di rumahnya sendiri di Fatubesi (Hatolia, Ermera) pada 14 Mei 1999 oleh milisi Darah Merah Putih. Dipimpin oleh komandan PS138 dan PS139, milisi itu, bersama dengan anggota-anggota SGI, menyerang rumah DE karena mereka tahu bahwa suaminya, DE1, telah melarikan diri ke hutan untuk bergabung dengan Falintil. PS139 masuk ke rumah, mengancam DE dengan pisau dan memerkosanya. Setelah itu, PS138 dan anggota-anggota SGI bergantian melakukan penganiayaan seksual. Mereka mengikat tangannya dengan kabel dan membawanya ke pos Darah Merah Integrasi di Hatolia di mana ia ditahan selama dua bulan. Ketika di sana ia terus menjadi sasaran pelecehan seksual. Ia mengatakan bahwa paling sedikit 24 anggota SGI dan milisi melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Setelah dua bulan, ia berhasil melarikan diri.⁸²

124. Pada Mei 1999 satu kelompok milisi yang bernama Kaer Metin Merah Putih (secara harfiah berarti Pegang Teguh Merah Putih, biasa disingkat KMP) melakukan sejumlah perbuatan kekerasan di seluruh kecamatan Lolotoe, Bobonaro. Panel Khusus Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili menyatakan tiga orang—Jhoni Franca, komandan KMP; Sabino Leite, kepala desa Guda (Lolotoe, Bobonaro); dan José Cardoso, komandan KMP—telah bersalah melakukan pemerksaan sebagai suatu kejahatan terhadap umat manusia. Ini adalah kasus pertama pemerksaan sebagai bagian dari kejahatan terhadap umat manusia yang diadili oleh Panel Khusus tersebut.⁸³

125. Juga pada Mei 1999 tiga orang perempuan, yang identitasnya dirahasiakan oleh Pengadilan, ditahan sewenang-wenang oleh KMP bersama dengan 13 orang lain dari Lolotoe. Setelah ditahan selama satu bulan dalam gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang letaknya di seberang Koramil Lolotoe, ketiga perempuan itu dibawa pergi dengan alasan mereka dipanggil oleh João Tavares, Panglima PPI (Pasukan Pejuang Integrasi). Mereka dimasukkan ke dalam ambulans pemerintah

* Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) diresmikan pada 17 April 1999 dalam suatu upacara resmi yang diadakan di halaman muka kantor gubernur pada waktu itu (sekarang dikenal dengan nama Palácio do Governo) di Dili. João Tavares adalah panglima PPI dan Eurico Guterres wakil panglimanya. Beberapa

yang dikendarai oleh seorang petugas kesehatan bernama PS140, bersama dengan komandan Koramil Lolotoe, Letnan Dua PS114 [orang Indonesia], dan komandan KMP PS142. Ketiga perempuan itu dibawa ke sebuah hotel di Atambua di mana mereka diperkosa berkali-kali. Salah seorang korban memberi kesaksian tentang pemerkosaan yang dialami, bahwa salah satu dari mereka terlebih dahulu disuntik dengan apa yang mereka perkirakan adalah obat kontrasepsi. Tiga perempuan itu diancam dengan berbagai jenis senjata, dan diancam akan dibunuh dan dibuang ke laut apabila tidak mau berhubungan seks. Sesudah diperbolehkan keluar kamar untuk makan, mereka diperkosa kembali malam berikutnya.⁸⁴

126. Pesta-pesta yang diadakan milisi merupakan gejala pra-pemungutan suara. Kelompok-kelompok milisi, dengan sumberdaya dan kekuasaannya, dapat menyelenggarakan pesta yang wajib dihadiri oleh perempuan-perempuan di desa. Pesta-pesta ini memberikan kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan. Dadurus Merah Putih (Gelombang Merah Putih, biasa disingkat DMP), kelompok milisi yang beroperasi di Desa Lourba (Bobonaro, Bobonaro), menyelenggarakan pesta semacam itu pada 4 Mei 1999. Dalam kesaksiannya, FE menyampaikan bahwa 14 perempuan, termasuk ia sendiri, dipaksa membuat kopi dan makanan untuk milisi. Ia dipanggil oleh komandan DMP dan diperkosa. Menurut kesaksiannya, 13 perempuan lainnya menderita kekerasan seperti itu juga.⁸⁵ FE memberikan kesaksian yang membenarkan adanya peristiwa ini.

Pada siang hari, salah seorang milisi mengunjungi rumah saya. Dia pura-pura mau menangkap ayam jantan saya sambil mengatakan, "Kamu sebentar dulu." Waktu itu suami saya...disuruh mengadakan operasi bersama dengan mereka sehingga ia tak di rumah. Milisi memerkosa saya pada hari itu juga, padahal waktu itu saya baru dua bulan melahirkan.⁸⁶

127. Seorang perempuan lain, GE, memberikan kesaksian bahwa ia diperkosa di rumahnya setelah pesta tersebut:

...[komandan] milisi PS383, PS143, PS144, PS145, dan PS146... memasukkan tangan ke dalam kutang dan menarik-narik susu kami. Kami terpaksa menuruti kemauan mereka karena mereka mengancam akan memukul kami dengan kayu balok. Dalam perjalanan pulang dari pesta, komandan DMP memanggil saya bersama tiga orang teman perempuan...untuk diinterogasi. Ia mendapat foto kami pada waktu kami memasak untuk Falintil. Saya menjawab, "Memang betul saya bersama teman-teman ini memasak untuk Falintil, tapi kami orang kecil yang tidak tahu menahu tentang politik. Kalau dia bilang lapar, yah saya harus layani, karena kita sama-sama manusia. Apa salahnya

jam kemudian, gerombolan milisi menyerang dan membakar rumah Manuel Carrascalão, tempat orang-orang yang mengungsi dari kampung halaman berlindung, membunuh 12 orang termasuk anak laki-lakinya, Manuelito [lihat Bagian 3: Sejarah konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa].

kalau mereka dikasih makan? Apalagi saya takut karena para Falintil itu membawa senjata.” Setelah selesai diinterogasi saya langsung pulang ke rumah. Begitu saya masuk ke dalam kamar ternyata empat orang milisi DMP—PS383, PS143, PS144, dan PS145—sudah menunggu di dalam kamar saya dalam keadaan telanjang. Mereka menarik saya dan menelanjangi saya lalu saya diperkosa secara bergantian. Pada saat itu anak-anak saya masuk ke dalam kamar, terus para pelaku memukul dan menendang anak-anak saya keluar dari kamar.⁸⁷

128. Kekerasan meningkat dramatis di hampir semua distrik dalam bulan-bulan menjelang pengumuman Jajak Pendapat, yang menyebabkan perpindahan penduduk secara besar-besaran. Para perempuan yang terpaksa pindah dari rumah dan desanya, sekali lagi berisiko diperkosa.

129. Pada April 1999, setelah diancam akan dibunuh oleh anggota-anggota milisi Sakunar (Kalajengking), HE meninggalkan rumahnya untuk mencari perlindungan di rumah kerabatnya di Lesuwen (Suai, Covalima). Kerabatnya juga seorang anggota Sakunar. Walaupun ia sudah berusaha keras untuk melindungi dirinya sendiri, HE diperkosa oleh seorang anggota milisi Laksaur bernama PS147.⁸⁸

130. Setelah pembantaian di Gereja Liquiçá pada 6 April 1999, banyak keluarga lari dari rumah mereka dan dalam kekacauan yang terjadi, banyak perempuan yang diperkosa. IE, seorang perempuan dari Desa Leolata, ditahan oleh anggota milisi Besi Merah Putih (BMP), PS148, dalam perjalanan pulang dari pasar pada 14 April 1999. IE dan seorang teman perempuannya dipaksa menandatangani pernyataan yang menuduh kepala desa Leotela menyembunyikan anggota-anggota Falintil di rumahnya. Seminggu kemudian pasukan BTT dan Kopassus datang untuk memaksa penduduk Leotela pindah ke Liquiçá, dengan ancaman akan dibunuh kalau menolak. IE lari dan tinggal dengan pamannya di Liquiçá, tetapi belum sebulan kemudian, PS148 datang mencarinya:

Pada 7 Mei 1999, sekitar pukul 9 malam, PS148 datang ke rumah paman saya dan mengatakan kepada paman bahwa saya harus menghadap Komandan BMP untuk diinterogasi. Ternyata, PS148 membawa saya ke suatu tempat bernama Kaeloho [Liquiçá]. Di sana saya mengalami penyerangan seksual. Ia memaksa saya untuk menciumnya dan melakukan hal yang tidak dapat saya ungkapkan di sini...

Tiga hari kemudian, tanggal 10 Mei 1999, kira-kira pukul 3 sore, PS148 datang ke rumah paman dengan mengendarai jip Hardtop. Kali ini dia beralasan hendak berbicara dengan saya mengenai surat untuk pemimpin-pemimpin masyarakat desa Leotela. Saya dibawa ke pantai, dekat Sungai Kaimeno. Dengan paksa dia melucuti pakaian saya, dan mendorong saya ke tanah. PS148 berkata jika saya menolaknya ia akan membunuh saya dan keluarga saya. Dia kemudian memerkosa saya dan mengancam akan membunuh saya jika melaporkan kepada istrinya.⁸⁹

131. JE baru berumur 17 tahun ketika pembantaian di Gereja Liquiçá terjadi. Pada 28 Mei 1999, dua orang milisi Besi Merah Putih yang dikenal dengan nama PS151 dan PS152 tiba di rumahnya di Desa Maumeta (Liquiçá, Liquiçá) pada pukul 03.00. JE lari untuk bersembunyi di gedung DPRD II Liquiçá, tetapi PS151 dan PS152 mengejanya dengan bersenjatakan dua senapan dan pisau, dan memerkosanya.⁹⁰ Dalam peristiwa lain pada hari itu juga, KE sedang menonton televisi di rumahnya di Maumeta (Liquiçá, Liquiçá) ketika seorang anggota milisi Besi Merah Putih bernama PS153 dan seorang anggota polisi yang dikenal dengan nama PS154 tiba di rumahnya. PS153 memerkosa KE dan mengancam akan membunuhnya jika ia memberitahu keluarganya. Lima hari kemudian, pada 2 Juni 1999, ia memerkosanya lagi. Akhirnya KE menjadi hamil dan melahirkan seorang anak sebagai akibat dari pemerkosaan itu.⁹¹

132. Kasus-kasus serupa dilaporkan dari distrik-distrik lain. Setelah suaminya lari ke hutan, LE pergi ke Kota Suai (Covalima) dengan ibu dan bibinya pada 25 April 1999. Setibanya mereka di Desa Ogues (Maucatar, Covalima), mereka diserang oleh dua anggota milisi Laksaur, PS154 dan PS155. LE dibawa ke sebuah ruangan di markas milisi dan ditanyai mengenai keberadaan suaminya. PS155 memerintahkan LE untuk pindah ke markas Laksaur. LE menolak, dan di sana ia diperkosa. Pada waktu itu ia sedang hamil.⁹²

133. Perempuan dalam keadaan rentan bukan hanya ketika mereka pindah untuk mencari keselamatan, tetapi juga ketika mereka ditinggal agar dapat mengurus rumah, ternak, orang tua, atau anak-anak yang masih kecil. Dalam suasana tanpa hukum sebelum Jajak Pendapat, orang-orang yang secara efektif kebal hukum merasa bebas melakukan kejahatan, termasuk pemerkosaan di dalam rumah korban sendiri.

134. ME, dalam pernyataannya kepada Komisi, memberikan kesaksian tentang pemerkosaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh seorang anggota milisi BMP di Maumeta (Bazartete, Liquiçá). Pada 1 Mei 1999, ME berada di rumahnya ketika ia diberi minuman bercampur obat oleh PS156, seorang anggota Besi Merah Putih. Ia menjadi begitu lemah sehingga PS154 dapat mengangkatnya dan membawanya ke dapur. Di sana mulutnya disumbat, ia diletakkan di tanah dan diperkosa. Akibatnya, tulang pinggulnya patah sehingga sampai sekarang ia tidak dapat melakukan pekerjaan berat.⁹³

135. NE diperkosa di rumahnya di *aldeia* Kawa-uman, Kasabauk (Tilomar, Covalima) pada 7 Juli 1999 setelah suami dan anak-anaknya mengungsi ke gereja Suai. Milisi Laksaur datang ke rumahnya dan salah seorang di antaranya, yang dikenal dengan nama PS157, mengancam, memukul, dan menendangnya hingga tulang dada dan rusuknya patah. Kemudian PS157 memerkosa NE sampai ia tak sadarkan diri.⁹⁴

136. ABLAI (Aku Berjuang Laksanakan Amanat Integrasi) adalah kelompok milisi lain yang menggunakan pemerkosaan sebagai bagian dari penyerangan mereka terhadap penduduk sipil. Dari pernyataan-pernyataan yang diterima CAVR, bisa diidentifikasi adanya satu pola kekerasan seksual sebagai bagian dari serangan-serangan ABLAI di sekitar Subdistrik Same (Manufahi) pada April 1999. OE dari Horeme, Same, memberikan kesaksian berikut ini:

Pada 17 April 1999 datang milisi Tim ABLAI untuk mencari penduduk yang bersembunyi tetapi Tim ABLAI tidak menemukan penduduk. Mereka membawa parang, pisau, surik [pedang], dan panah sambil berteriak dan mengancam, "Kalau penduduk tidak keluar dari tempat persembunyian maka kami akan membunuh laki-laki dan memerkosa perempuan." Mendengar ancaman milisi tersebut kami pun keluar dan berjalan menuju ke kapel yang berdekatan dengan rumah seorang milisi yang bernama Julião. Di sana PS158 menarik tangan saya menuju ke dalam salah satu kamar. Saya menolaknya tetapi ia mengancam saya, "Kalau tidak ikut, saya bunuh kamu." Di kamar tersebut saya diperkosa secara bergiliran. Setelah PS158 selesai memerkosa, dia menyuruh salah satu temannya untuk memerkosa saya. Setelah selesai memerkosa saya mereka meninggalkan saya di tempat tidur begitu saja. Saya sangat malu pada saat bangun dari tempat tidur.⁹⁵

137. Korban kedua, PE, menyampaikan apa yang terjadi padanya di desa yang sama pada hari itu juga. Ia disuruh memasak dan dibawa ke sebuah kamar kosong dan diperkosa berkali-kali di sana.⁹⁶

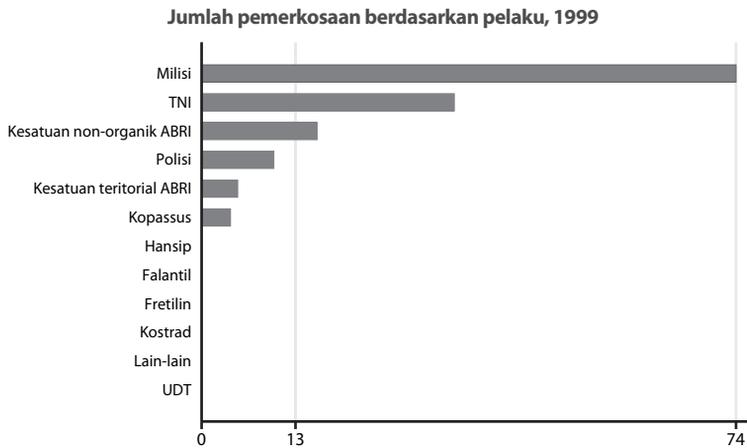
138. Korban yang ketiga dan keempat, QE dan RE, diperkosa pada hari yang sama. Beberapa hari kemudian mereka dibawa paksa ke pos milisi di mana mereka diharuskan tinggal sampai September 1999. RE, yang ayah dan saudara laki-lakinya terbunuh dalam peristiwa ini, menyampaikan pengalaman pemerkosaannya oleh anggota-anggota milisi ABLAI.

Pada 17 April 1999 milisi mengepung aldeia Orema, Hola Rua [Same, Manufahi], dan melakukan operasi pembersihan untuk membunuh kami. Kira-kira pukul 10.00 sekelompok milisi, termasuk PS159, PS160, PS161, PS162, dan PS163, datang ke rumah saya mencari saya. PS159 berkata, "Kalau kamu berani menolak tidur dengan saya, saya akan bunuh kamu." Mendengar hal ini, saudara laki-laki saya... berusaha mengalihkan perhatian PS159 dengan cara memberinya makan. Tetapi setelah ia makan ia menarik saya ke kamar. Di sana ia membuka pakaian saya dan memerkosa saya. Ia membawa parang dan pisau ke dalam kamar. Setelah memerkosa saya, ia bilang saya tidak boleh memberi tahu siapapun. Beberapa hari kemudian milisi PS161 dan PS162 datang ke rumah untuk membawa saya [dan tiga teman perempuan lain] ke kampung Leoprema. Kami tinggal di rumah PS160 sampai Agustus. Setiap malam Minggu selama kami tinggal di sana, PS162, PS159, PS162, dan PS163 membawa kami dan memaksa kami menemani mereka berdansa. Pada saat dansa kami berempat dicium, dipeluk, lalu dibawa ke luar tenda dan diperkosa secara bergiliran sampai pagi hari.⁹⁷

B. *Pemeriksaan setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat (September-Oktober 1999)*

139. Data yang dikumpulkan oleh Komisi secara jelas menunjukkan bahwa kekerasan memuncak lagi setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat pada 4 September 1999. Pemeriksaan terjadi bersamaan dengan pemindahan paksa, pembakaran rumah, pembunuhan, penghilangan, dan perbuatan-perbuatan kekerasan lainnya. Distrik-distrik di bagian barat, yang mengalami kekerasan lebih banyak selama masa setelah pemungutan suara, juga melaporkan lebih tingginya insiden kekerasan seksual. Dari 47 kasus pemeriksaan yang dilaporkan dilakukan setelah pemungutan suara 1999 dan oleh Komisi dimasukkan untuk analisis statistik, 81% (34/47) terjadi di distrik-distrik bagian barat Timor-Leste atau di Timor Barat.

140. Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik di bawah ini, anggota-anggota tentara Indonesia dan milisi adalah pelaku dari semua kasus pemeriksaan pada 1999 yang dilaporkan kepada Komisi.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali, karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara beberapa pelaku

141. Pemeriksaan terjadi dalam konteks perpindahan penduduk yang luas, ketika banyak keluarga meninggalkan rumah mereka dan menjadi terpisah satu sama lain, meninggalkan orang yang paling rentan menjadi sasaran kekerasan. Dua perempuan bersaudara dari Namleso (Liquidoe, Aileu), SE dan TE, masing-masing berusia 24 dan 15 tahun, dipindahkan secara paksa oleh milisi AHI (Aileu Hametin Integrasi, Aileu Memperkuat Integrasi), kemudian diperkosa oleh prajurit-prajurit TNI di tengah perjalanan. SE memberikan kesaksian berikut ini:

Pada 18 September 1999, kelompok AHI menyuruh kami pengungsi berangkat dengan berjalan kaki menuju ke Aileu. [Kami] tiba di Aileu pukul 3 sore dan ditampung di Puskesmas. Saya bersama keluarga tidur di teras. Pada malam hari sekitar pukul 7 tiga orang milisi—PS 156 dari Fahiso, dan PS165 dan PS 167 dari Namleso [satu desa di Subdistrik Lequidoe, Aileu]—datang mengambil saya. Mereka berpakaian kaos AHI dengan membawa senjata berupa pisau dan senapan rakitan. Mereka memaksa saya untuk ikut bersama mereka ke sebuah rumah kosong. Ketiga milisi tersebut menyuruh saya masuk dan kemudian mereka bersembunyi entah ke mana. Tiba-tiba datang dua orang tentara Kodim Aileu yang saya kenal tetapi tidak tahu nama mereka. Mereka berpakaian kaos hitam dan celana hitam seragam AHI. Kemudian dua orang tentara itu menyuruh saya membuka seluruh pakaian dan saya terpaksa harus melayani mereka secara bergantian demi menyelamatkan nyawa saya.⁹⁸

142. TE, adik perempuan SE, diperkosa oleh anggota milisi bernama PS384 sesudah ia dibawa dengan motor dari Puskesmas ke sebuah rumah kosong. TE bersaksi:

Ia meniduri saya di situ sambil menodongkan pisau ke leher saya dan mengatakan, “Cepat lepas pakaianmu dan jangan berteriak.” Langsung ia membanting dan memerkosa saya. Ia menaruh pisaunya di sebelahnya sehingga saya pasrah saja. Setelah selesai hubungan seksual, saya merasa sakit di bagian vagina.⁹⁹

143. Malam berikutnya, TE kembali diambil dari Puskesmas ketika ia sedang tidur. Seorang milisi yang bernama PS397 membawanya ke sebuah rumah kosong dan meninggalkannya di sana. Karena ia melihat seseorang yang berpakaian loreng militer memegang golok, ia takut dan lari kembali ke Puskesmas. Namun ia didatangi lagi, kali ini oleh dua orang tentara berpakaian seragam yang mengancam akan menembaknya bila ia menolak menyerahkan diri. Ia dipaksa kembali ke rumah kosong tersebut dan mengalami pemerkosaan yang kedua kalinya. Sesudah pemerkosaan itu, ia disuruh memanggil kakak perempuannya untuk datang ke sana, namun ia tidak melakukan suruhan ini. Tetapi hal ini tidak menyelamatkan kakak perempuannya dari pemerkosaan lain.

Kira-kira pukul 2 pagi, si pelaku menyuruh anakbuahnya tiga orang datang ke tempat saya dan membangunkan kakak saya. Mereka katakan pada kakak saya bahwa dia dipanggil oleh atasan, maka kakak saya mau tidak mau harus mengikuti karena mereka bersenjata. Setelah kakak saya tiba di tempat di mana saya diperkosa, kakak saya juga mengalami hal yang sama dengan saya. Ia diperkosa oleh militer tapi kakak saya tidak dapat melihat si pelaku karena tempat itu gelap.¹⁰⁰

144. Di Subdistrik Bobonaro (Bobonaro), paling sedikit tiga peristiwa pemerkosaan dilaporkan terjadi di mana milisi atau orang sipil Timor membawa seorang perempuan kepada prajurit-prajurit tentara Indonesia untuk diperkosa oleh mereka. UE menguraikan bagaimana milisi DMP (Dadurus Merah Putih) dan pasukan TNI telah menyerang dan secara paksa memindahkan penduduk desa Oat ke beberapa tempat dan akhirnya sampai di kota Bobonaro. Menurut kesaksian UE, tiga orang milisi dari Desa Malilait (Bobonaro, Bobonaro), bernama PS385, PS386, dan PS387, menyuruh anggota keluarganya yang bernama UE1 untuk membawa anak perempuan UE kepada mereka. Anak perempuan UE dan keponakannya bersembunyi di tempat gelap di rumah tempat mereka tinggal. Setelah beberapa lama, tiga orang anggota milisi itu datang sendiri ke rumah itu. UE mengatakan kepada para pewawancara, “Karena anak saya masih remaja, saya merelakan diri untuk mengikuti mereka.” Para milisi membawa UE ke markas Koramil Bobonaro, dan menyerahkannya kepada Komandan Koramil yang kemudian memerkosanya di salah satu kamar.¹⁰¹

145. Kesaksian VE, juga dari Desa Oat, serupa dengan kesaksian UE di atas. VE adalah seorang pengungsi dari Bobonaro, dalam perjalanan ke Atambua. Ia diambil oleh seorang Timor-Leste yang bernama PS168 dan dibawa ke sebuah rumah yang tidak dikenalnya. Ia bersaksi:

Si pelaku (yang tidak saya kenal) memberitahu kepada orang-orang di dalam rumah agar mematikan lampu. Ia kemudian membawa saya ke dalam kamar tidur, dan melakukan hubungan seksual dengan saya...Saya tidak bereaksi karena takut ia akan memotong leher saya. Saya menyerah karena ketakutan dan [juga] demi menyelamatkan nyawa keluarga.¹⁰²

146. Menyusul pengumuman hasil Jajak Pendapat, pemerkosaan, yang didorong oleh keinginan balas dendam terhadap orang yang melarikan diri, terus berlanjut. WE menyampaikan kepada Komisi pemerkosaan yang dialaminya di Desa Mauabu (Hatolia, Ermera) pada 9 September 1999. Seorang anggota pasukan Rajawali TNI, PS169, dan kepala desa, PS170, tiba di rumahnya untuk mencari suaminya yang sudah melarikan diri ke hutan. Karena suaminya tidak ada mereka membakar sepeda motor milik keluarga itu dan WE diperkosa oleh PS169.¹⁰³

147. Dalam sebuah kasus kekerasan pengganti lainnya, XE diperkosa di depan suaminya. Pada September 1999, XE dan suaminya sedang dalam perjalanan ke Lautém ketika mereka dihadang oleh anggota TNI yang tidak dikenal yang mengarahkan senapan dan parang kepada mereka dan mengancam akan membunuh mereka karena orangtua mereka anggota CNRT. Ketika para prajurit itu mulai membuka pakaian XE, suaminya berusaha mencegah tetapi kepalanya dipukul dengan popor senapan hingga pingsan. Kemudian XE diperkosa. XE dan suaminya memberi para anggota tentara itu dua helai kain tenun tradisional (tais) dan uang Rp200.000,00 agar mereka dilepaskan.¹⁰⁴

148. Meningkatnya kekerasan dan impunitas menciptakan suatu keadaan di mana bentuk kekerasan yang paling brutal terhadap perempuan dapat terjadi—yaitu kejahatan ganda pemerkosaan dan pembunuhan. Paling sedikit ada dua kasus pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi pada September 1999.

149. Francisco Martins, yang pada waktu itu adalah anggota milisi Darah Merah Integrasi, memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai pemerkosaan dan pembunuhan terhadap YE di Desa Lauala (Ermera, Ermera).

Pada 6 September, saya sedang dalam perjalanan pulang ke Gleno dari Atambua. Pada malam itu, sekitar pukul 9 komandan milisi Darah Integrasi [Darah Merah Integrasi] PS172, membawa seorang perempuan muda bernama YE ke pos kami di Gleno di belakang pasar di Wisma Liurai. Malam itu saya lihat PS172 dan tiga orang anggota milisi lain, PS173, PS174, dan PS175 membawa YE untuk tidur dengannya di rumah itu. Esok paginya, 7 September 1999, ketika YE bangun, tubuhnya berlumuran darah segar dan pakaiannya juga berlumuran darah. Ia menangis dan minta pertolongan kami untuk membawanya ke gereja. Baru waktu itulah saya tahu bahwa ia sudah diperkosa karena ia tidak dapat berjalan [dengan normal]...¹⁰⁵

150. Setelah pemerkosaan itu ia dikembalikan ke pos, diikat, dan akhirnya dibunuh.

Pemerkosaan dan pembunuhan ZE, 11 September 1999

Ibu ZE, ZE1 mengungkapkan pemerkosaan dan penghilangan paksa terhadap anaknya, ZE, di Ermera pada 11 September 1999. ZE adalah seorang perempuan anggota aktif CNRT dan petugas pemungutan suara UNAMET. Ketika kantor UNAMET di Gleno, Ermera, dievakuasi pada 31 Agustus 1999, ZE bersama dengan staf internasional dan lokal UNAMET, dibawa ke Dili. Tetapi, menurut kesaksiannya, pada 4 September 1999 ia dibawa kembali ke Kodim Gleno dengan mobil polisi. Ibu ZE memberikan kesaksiannya kepada Komisi mengenai pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak perempuannya:

Sekitar pukul 8 malam, seorang anggota TNI dari BTT 744 bernama PS176 dan orang-orangnya...tiba di rumah tetangga saya, tempat kami menginap karena rumah kami sudah dibakar beberapa hari sebelumnya. Sebelum PS176 masuk rumah, kami sudah dikepung oleh pasukan Rajawali. PS176 masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu. Kemudian ia memanggil ZE ke luar dari belakang dan menyuruh dia duduk di sebelahnya. Di hadapan saya ZE ditariknya mendekat, dipeluk, dan dicium olehnya...saya masuk kembali ke dalam kamar karena saya merasa sakit hati melihat anak saya diperlakukan seperti itu. Pada waktu itu istri tetangga saya

menyuruh anak perempuan ZE dan anak perempuannya sendiri untuk pergi ke belakang. Ia mengunci kamar itu agar mereka tidak harus melihat apa yang diperbuat PS176 terhadap ZE.

Setelah tetangga saya ke luar dari kamar tamu, PS176 menarik ZE ke depan rumah di sebelah tangga yang ada di beranda, dan di situlah ia memerkosa ZE. Kami melihat dari jendela kamar... Kami mendengar jeritan ZE tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin karena teman-temannya merasa lama menunggu, mereka menembak ke udara satu kali, dan PS176 menghentikan perbuatan itu [dan pergi]...Ketika kami keluar, ZE menangis. Ia bilang, "Saya malu karena saya diperlakukan seperti binatang. Apakah kalian mendengar saya diperkosa di sebelah tangga itu?" Kami menjawab, "Kami melihat dan mendengar, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kita semua tunggu mati saja." Setelah ia minum air ia menyuruh kami masuk ke dalam dan ia membuka seluruh pakaiannya guna untuk menunjukkan kepada saya dan tetangga itu bahwa tubuhnya sekarang sudah rusak. Ia bilang sambil menangis, "Kalian lihat sendiri badan saya semuanya rusak. Mereka semua memerkosa saya." Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa kulitnya dari buah dada sampai ke kemaluannya hitam dan terkelupas semua.

Pada 12 September mereka datang lagi untuk mengambil ZE [dan] ia pergi bersama mereka. Kami pergi ke misa dan kemudian kami pun diambil dengan mobil dan dibawa ke Gleno...Setelah itu ZE dipaksa memasak untuk TNI, polisi, dan milisi. Pada 13 September 1999 datanglah seorang komandan Darah Merah Integrasi yang dikenal dengan nama PS177 bersama anggota-anggotanya. PS177 bilang kepada ZE, "Ibu guru, masuk mobil." Saya bilang kepada mereka kalau begitu saya akan ikut bersama anak saya, tapi mereka tidak setuju...Saat itu ZE mengatakan kepada saya, "Mama, sekarang PS177 yang ambil saya. Pasti saya akan dibunuh." Saya menunggu dari pagi itu hingga pukul 5 sore, tapi ZE tidak muncul. Tiba-tiba seorang anggota milisi Darah Merah bernama PS178 datang. Ia mengatakan kepada saya, "Mama, jangan menunggu terus karena ibu guru sudah dibunuh." Saya bilang, "Kalau begitu, tunjukkan mayat ZE kepada saya." PS178 mengatakan, "Baru kali ini saya melihat orang Ermera membunuh seorang wanita."¹⁰⁶

151. Sejumlah kesaksian mengenai kekerasan seksual pada waktu itu mengindikasikan bahwa ada "pusat-pusat pemerkosaan" di tengah-tengah kekacauan dan kekerasan selama dan setelah Jajak Pendapat. Di tempat-tempat itu perempuan ditahan secara paksa dan bisa diperkosa berulang kali. Misalnya, di Desa Malilait (Bobonaro) milisi Hametin Merah Putih (arti harfiah: Memperkuat Merah Putih) menangkap dan menahan beberapa orang perempuan di sebuah rumah. Rumah tersebut, menurut

satu wawancara dengan Bosco da Costa, adalah kepunyaan satu keluarga yang sudah lari ke Atambua (Timor Barat) dan diambil alih oleh milisi. Orang-orang tua dan empat orang perempuan muda disekap dalam rumah itu. Komandan kelompok milisi Hametin Merah Putih yang bernama PS179, wakilnya PS180, dan kepala desa Aiasa PS180 adalah orang-orang yang terlibat dalam penahanan orang-orang di rumah ini. Menurut Bosco da Costa, Komandan Koramil dan Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor) tidak menegur milisi walaupun mereka mengetahui tentang kejahatan ini.¹⁰⁷

152. AF, seorang korban pemerkosaan berulang-ulang, mengisahkan bagaimana kejahatan ini dilakukan secara bersama oleh anggota milisi dan TNI, dan tidak hanya dirinya saja yang menjadi korban pemerkosaan:

Pada 10 September 1999 milisi dan TNI datang ke rumah dengan membawa senjata dan mengancam akan menghabisi saya dan seluruh keluarga apabila saya tidak mau ikut ke pos milisi. Karena kami semua waktu itu sangat ketakutan dan panik, akhirnya sayapun menyerah. Ayah, ibu, dan anak perempuan saya juga pasrah dan membiarkan saya dibawa. Di markas milisi, anggota milisi menyerahkan saya ke tiga orang TNI yang memerkosa saya selama tiga hari tiga malam, dari 10 sampai 12 September 1999.

Malam yang pertama saya diperkosa oleh anggota TNI yang bernama PS182. Hari kedua saya diperkosa oleh PS388 [orang Timor-Leste]. Istri PS388, PS389, turut membantu...dengan menyediakan rumahnya untuk digunakan oleh TNI dan milisi sebagai tempat operasi. Salah satu teman saya...juga diperkosa di rumah PS389 pada 18 September 1999 dan ia sekarang menjadi sangat trauma. Pada hari ketiga, PS388 menyerahkan saya kepada temannya yang lain—anggota TNI bernama PS183 [orang Timor-Leste]. Ia memerkosa saya pada malam ketiga tanggal 12 September 1999.¹⁰⁸

153. Komisi menerima bukti memperkuat mengenai pusat pemerkosaan ini dari BF, seorang perempuan lain yang juga menjadi korban pemerkosaan di rumah yang sama:

Rumah komando itu milik PS389 [orang Timor-Leste] dan PS388, seorang anggota TNI dari Tapo. Di sana saya mengira akan dijadikan pembantu PS389 dan bertugas memasak, menyediakan kopi untuk komandan dan para milisi, akan tetapi dugaan saya salah. Rupanya mereka merencanakan tindakan pemerkosaan terhadap diri saya. Mengetahui hal itu saya merasa takut dan ngeri sekali. Saya menangis dan minta tolong kepada PS389 untuk menolong melepaskan saya, tapi dia malah marah dan membentak saya. “Sudah banyak perempuan dibawa ke sini dan mereka menurut saja. Kenapa kamu keras kepala?” Saya hanya bisa diam dan menangis saja diam-diam. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada 18 September malam, PS184 [orang Timor-Leste] datang ke rumah PS389. PS389 sengaja pergi ketika PS184 mengunci saya di dalam sebuah kamar dan memerkosa saya.¹⁰⁹

Pemeriksaan dan perbudakan seksual sesudah pembantaian di Gereja Suai, 6 September 1999

Pemeriksaan dan perbudakan seksual terhadap perempuan setelah serangan terhadap Gereja Suai tanggal 6 September 1999 diorganisasikan secara sistematis. Pemeriksaan terjadi di beberapa tempat di mana perempuan-perempuan yang tadinya mengungsi di Gereja Suai ditempatkan untuk sementara waktu—di Kodim Suai, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2, panti asuhan, dan di Gedung Dharma Wanita. Perempuan juga diperkosa dalam perjalanan ke Atambua, Timor Barat, dan ketika berada di kamp pengungsian di Atambua. Komisi mendapatkan bukti tentang pemeriksaan dan perbudakan seksual dari 11 kesaksian yang menyebut milisi Laksaur dan Mahidi (Mati Hidup Integrasi dengan Indonesia) serta pasukan keamanan Indonesia sebagai pelaku kejahatan ini.

CF adalah salah seorang pengungsi yang diserang di Gereja Suai yang melihat sendiri dibunuhnya salah seorang pastor di sana, Pastor Francisco. Setelah itu ia ditahan di gedung SMP 2 dan menyaksikan perempuan-perempuan dibawa keluar oleh milisi. Akhirnya ia sendiri menjadi korban pemeriksaan oleh seorang anggota milisi dan beberapa hari kemudian oleh seorang anggota polisi. CF mengatakan kepada Komisi:

Kami dipaksa dibawa ke gedung SMP 2. Di sana kami dicacimaki oleh milisi dan tidak diberi makan selama tiga hari. Setiap malam kami diganggu dan gadis-gadis dibawa pergi oleh para milisi. Pada 11 September, tepatnya pukul 9 malam, seseorang datang dengan membawa lampu senter sambil mengarahkannya ke wajah saya. Ia membuka kain sarung yang saya pakai untuk menutup wajah saya. Milisi Laksaur itu menyuruh saya bangun dan mengancam kalau tidak bangun mereka akan menembak orang-orang yang berada di sekitar saya. Saya terpaksa bangun dan mereka menarik saya keluar dari ruangan itu. Saya dibawa pergi oleh PS185, seorang milisi Laksaur yang memerkosa saya; setelah itu saya dikembalikan ke ruang semula, di mana saya hanya bisa menangis...Keesokan harinya kami dibawa ke gedung Dharma Wanita. Di sana kami diteror dan perempuan-perempuan dibawa pergi. Pada 14 September, seorang polisi yang kabarnya anggota SGI, memaksa saya masuk sebuah mobil. Saya ketakutan dan menangis. Seorang milisi mengatakan, "Lebih baik ikut kalau tidak nanti malam saya tembak kamu." Saya dibawa ke salah satu rumah milik anggota polisi dan diperkosa. Setelah itu saya dikembalikan ke gedung Dharma Wanita saat orang-orang lain sudah tidur. Seorang milisi Laksaur mengancam, "Hari ini kamu pergi dengan polisi, kalau besok kami panggil kamu tidak mau, kamu akan mati."¹¹⁰

Irene dos Santos juga memberi kesaksian kepada Komisi tentang pemerkosaan-pemerkosaan yang terjadi sesudah penyerangan Gereja Suai. Pada 7 September 1999, Irene melihat dua orang perempuan, DF dan EF diambil secara paksa oleh milisi Laksaur yang dikenal bernama PS186, PS187, dan PS188. Ketiga milisi ini memukul DF dengan keras sampai darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Akhirnya DF terjatuh ke tanah dan diperkosa dalam keadaan tidak sadar. Akibat dari pemukulan yang berat itu korban mengalami perdarahan selama empat bulan, kemudian meninggal dunia.¹¹¹

EF adalah seorang perempuan muda pemberani yang bersaksi pada Audiensi Publik Korban *Rona Ami-nia Lian* (Dengarkan Suara Kami) yang diselenggarakan oleh Komisi di Dili pada 11-12 November 2002. Ia menyaksikan banyak orang yang dibunuh dalam pembantaian di Gereja Suai, termasuk keluarganya sendiri. Orang-orang yang masih hidup dibagi dalam dua kelompok—sekitar 75 orang dibawa ke Kodim dan sekitar 50 orang dibawa ke gedung SMP 2. EF menyampaikan kepada Komisi:

Kami dibawa ke gedung sekolah—sekitar 50 orang termasuk anak-anak. Saya mendengar para milisi mengatakan “Jangan bunuh yang ini, kita perkosa saja.” Saya takut dan tidak berani melihat muka mereka. Dalam perjalanan menuju ke SMP 2, kami dikawal oleh polisi dari Jawa, berpakaian seragam...Di sekolah itu kami semua dimasukkan ke dalam salah satu ruangan yang gelap...Seorang milisi yang bernama PS189, seorang guru dari kampung Leogor, datang memaksa saya untuk tidur bersamanya, tetapi saya menolak. Ia menjadi marah, menendang punggung saya, menampari muka saya sampai bengkak dan saya jatuh ke lantai. Kemudian ia memaksa membuka pakaian saya dan memerkosa saya.

EF mengalami pemerkosaan beruntun di gedung sekolah itu. “Pada malam tanggal 10 September, mereka memeriksa dan meminta uang saya. Karena takut saya memberikan uang Rp100.000,00 kepada PS398, Rp100.000,00 kepada PS399, dan Rp50.000,00 kepada PS400. Dalam kegelapan kami bersama perempuan-perempuan yang lain diperkosa.” Menurut kesaksiannya, paling sedikit tiga perempuan lainnya diperkosa oleh milisi yang bernama PS191 dan PS192. Pada 13 September 1999 pengungsi-pengungsi itu dimuat dalam sebuah truk Hino bersama tentara Indonesia dan milisi, dan dibawa ke sebuah kamp [di Timor Barat] untuk tinggal bersama pengungsi lainnya. Tidak lama kemudian PS189 menemukan EF, dan memaksanya masuk ke dalam situasi perbudakan seksual. EF mengatakan:

Ia mengatakan sudah mencari saya selama dua hari, ia memukul saya dengan senjata rakitan persis di mulut, menendang dada dan memukul punggung saya di depan banyak orang. Pada malam harinya, ia membawa saya pindah ke rumahnya dan setelah

sampai di rumah tersebut...ia kembali memerkosa saya. Saya tinggal bersama orang ini selama tiga bulan 16 hari. Pada pagi hari ia ke luar dan mengunci saya di dalam kamar dan ketika ia kembali dia membuka pintu dan mengulangi perbuatannya.¹¹²

Mereka yang ditempatkan di markas Kodim Suai mengalami pengalaman kekerasan seksual seperti itu juga. FF mengungsi ke gereja Suai bulan Juli 1999. Suaminya, seorang anggota CNRT, telah terlebih dahulu lari ke hutan. Ia mengatakan:

Penyerangan besar-besaran dilakukan oleh milisi Laksaur di Gereja Suai. Di dalam penyerangan itu juga ada tentara Indonesia yang tidak berpakaian seragam. Senjata yang mereka gunakan adalah senjata rakitan, senjata api, parang, samurai...Banyak korban jiwa yang saya lihat.

FF lolos dari kematian, namun kemudian menjadi korban pemerkosaan dan perbudakan seksual. Setelah pembantaian, mereka yang masih hidup dikumpulkan:

Kami disuruh berkumpul dan tidak boleh bergerak. Mereka mengancam akan membunuh siapa saja yang bergerak. Pada pukul 3 sore saya dan keluarga lainnya dibawa ke Kodim. Pada 7 September, sekitar tengah malam, PS192 mengancam dan memerkosa saya. Saya tidak melawan karena terlalu ketakutan.

Sesudah lima hari, FF dipindahkan ke Koramil kemudian ke satu panti asuhan, di mana ia kembali diperkosa oleh laki-laki yang sama:

Pada waktu ia melakukan hal itu, di luar ada empat orang anggota TNI yang sedang bertugas malam. Keesokan harinya, pukul 6 pagi, saya dibawa keluar oleh PS192 dengan sepeda motor Yamaha dari panti asuhan ke Rai Henek Oan [Betun, Timor Barat]. Sampai di sana ia mengancam saya dengan pisau. Selama saya berada di sana saya diperistri olehnya. Ia mengatakan bahwa saya harus menjadi istri mudanya karena suami saya [tidak mendukung otonomi]. Saya harus jadi gundiknya karena saya selamat dari tragedi di Gereja Suai.¹¹³

GF berumur 15 tahun ketika ia bersama bibi dan adik laki-laknya mencari perlindungan di Gereja Suai. Bibinya memberikan kesaksian mengenai penculikan dan perbudakan seksual terhadap GF:

Dalam pembantaian itu, adik laki-laki GF yang berumur 13 tahun dibunuh. Kami dan pengungsi-pengungsi lain dipaksa meninggalkan gereja. Kami dibagi dalam dua kelompok—sebagian dibawa ke Kodim dan sebagian lagi ke SMP 2 Suai. GF dan saya berada di Kodim selama seminggu sampai 12 September 1999. Di Kodim, di depan saya, PS193 dan seorang anggota milisi Laksaur, PS194, melingkarkan kalung di leher GF. PS194 berkata, "Ini adalah hadiah perang saya. Mulai sekarang GF jadi istriku yang ketiga." Sejak saat itu GF dipisahkan

dari keluarganya dan dibawa ke mana saja PS194 pergi. GF dibawa tinggal di markas Laksaur di Raihenek, Betun, Timor Barat.¹¹⁴

Dalam kesaksiannya kepada Komisi, HF mengisahkan bagaimana ia diambil paksa dari Gereja Suai dan dibawa ke Kodim setelah pembantaian itu. Selama delapan hari ditahan, ia berkali-kali diperkosa oleh PS194, PS196, dan empat orang milisi lain. Pada 14 September ia dipindahkan ke Atambua di mana ia diperkosa berkali-kali oleh PS197, PS198, dan empat orang anggota milisi Laksaur lain.¹¹⁵

Seorang perempuan muda, IF, hampir saja terbunuh pada pembantaian di Gereja Suai. Setelah keadaan menjadi agak tenang:

Bibi saya dan saya serta pengungsi-pengungsi lain menginap di Kodim. Kami selalu diganggu selama kami di sana. Banyak perempuan yang dibawa pergi pada malam hari. Beberapa laki-laki datang dengan lampu senter dan mengarahkan sinarnya kepada kami ketika kami sedang tidur. Kemudian mereka memaksa perempuan-perempuan keluar dengan mereka.

IF mengatakan bahwa pada 14 September, ia dibawa ke Betun, Timor Barat, dan diperkosa:

Sekitar pukul 6 atau 7 malam empat orang laki-laki datang dengan jip Hardtop. Dua orang di antaranya bersenjata. Mereka membawa saya dengan jip itu ke sebuah hutan di mana dua orang milisi Laksaur bergantian memerkosa saya.¹¹⁶

JF adalah seorang pengungsi yang dibawa ke kantor Kodim, kemudian dipaksa dibawa ke Timor Barat, tempat banyak orang yang selamat dari pembantaian di Gereja Suai itu dibawa:

Pada waktu itu, orang-orang yang masih hidup...perempuan dan anak-anak dipisahkan ke dalam dua kelompok yang terdiri atas kira-kira 100 orang. Kami dibawa ke Kodim dan lainnya ke gedung SMP. PS194, saudara laki-lakinya, yang menjadi kepala desa Moruk, dan beberapa orang milisi yang mengenakan pakaian kaus hitam Laksaur membawa kami ke sana. Mereka membawa senjata rakitan, golok, dan AR [sejenis senapan semi-otomatis], sedangkan militer dan polisi berpakaian seragam tetapi tidak bersenjata.

Pada 11 September, JF dibawa ke kamp pengungsi di Wemasa, Timor Barat. Sembilan hari kemudian beberapa milisi Laksaur—PS194, PS199, PS200, PS201 (seorang guru sekolah dasar), PS202, dan PS203—menarik JF, yang sedang menggendong anaknya, serta ipar perempuannya dan membawa mereka naik ke mobil di mana sudah ada beberapa orang perempuan. Mereka dibawa ke sebuah tempat terpencil di mana JF diperkosa bergantian oleh PS199 dan PS201. Ia mengungkapkan pemerkosaan tersebut:

PS199 mengambil saya dari kendaraan itu, menyuruh saya menaruh anak saya di tanah dan membuka pakaian saya. Kemudian ia memerkosa saya. Setelah ia selesai saya menggendong anak saya lagi. Ketika saya kembali ke mobil, PS201 mengambil saya dan dia melakukan hal itu lagi pada saya. Anak saya menangis, tapi saya tidak dapat berbuat apa-apa karena pada waktu itu saya merasa sangat kesakitan. Setelah mereka memerkosa saya, saya dikembalikan lagi. Waktu itu pukul 1 pagi. Dalam perjalanan pulang mereka gembira sekali dan tertawa-tawa.¹¹⁷

Seminggu kemudian JF diperkosa lagi, kali ini oleh seorang pegawai negeri sipil Kodim Suai bernama PS204. Pemerkosaan ini terjadi di kamp pengungsian, di hadapan ibu dan ipar perempuannya.

KF ingat secara terperinci bagaimana para pengungsi dipindahkan dan Timor Barat. Menurut kesaksiannya:

Pada hari Rabu [15 September 1999], seorang anggota Kodim 1635, seorang Pratu [Prajurit Satu] yang namanya tidak saya ketahui, tiba dengan sebuah truk dan membawa kami 57 orang, termasuk anak-anak, ke Wemasa di Timor Barat.

Pada pukul 11 tanggal 5 Oktober 1999 malam, Komandan PS194, PS202, PS200, PS190, dan Prajurit Satu PS206 dari kesatuan [Batalion Infanteri] 144 datang ke tempat kami ketika kami sedang tidur. Mereka berpakaian tentara dan bersenjata. Mereka mengancam akan membunuh kami. Saya diperkosa oleh Komandan PS194. Setelah selesai ia berkata, "Kamu cuma seperti pelacur, untuk dipakai kemudian dibuang."¹¹⁸

LF1 juga menceritakan mengenai pengalamannya setelah suaminya dan Pastor Francisco dibunuh dalam pembantaian itu:

...kami yang masih selamat diperintahkan keluar [dari gereja]. Kami didorong, ditendang dengan sepatu tentara, diinjak, dan dipukul. Mereka menodongkan senapan dan parang kepada kami di sepanjang jalan dari gereja sampai ke Kodim 1635...Ada banyak orang di Kodim, di antaranya Domingas, istri dari ketua zona [CNRT] Subdistrik Zumalai [Covalima] dengan anak-anak perempuannya, Zulmira, Fátima, Agustinha, Cinta, dan Monica... Ketika di Kodim kami dimaki-maki, diejek, dan diberi sisa-sisa makanan. Perempuan-perempuan lain dan saya tidak mau makan karena kami takut diracun. Pada 13 September 1999...Kasdim memerintahkan agar kami dipindahkan ke Betun [Timor Barat] dengan empat truk...tapi di jalan simpang Camenasa [Suai, Covalima] kami ditinggalkan di pinggir jalan.

Pada 14 September 1999, kira-kira pukul 7 malam, seorang anggota Laksaur, PS208, membawa keponakan perempuan saya yang waktu

itu berada dengan saya. Ia dipaksa naik ke atas jip Hardtop dan dibawa pergi. Pada malam itu juga pukul 19.30, saya dan seorang teman juga melanjutkan perjalanan dengan bantuan seorang anggota anggota Mahidi yang kami kenal...ia membawa saya berjalan kaki ke Betun. Kami dikawal oleh dua orang anggota polisi yang bersepeda motor. Berjalan dari jalan simpang Camenasa sampai ke Betun makan waktu delapan jam. Kami tiba tanggal 15 September 1999 pukul 10 pagi. [Ketika kami baru saja tiba] keponakan saya dibawa kembali oleh anggota Laksaur PS208 dengan sepeda motor. Ketika turun dari sepeda motor ia tidak dapat berjalan karena ia telah diperkosa. Ia tiba dengan luka-luka dan darah di kemaluannya, saya merawatnya...ia minum [ramuan] air dan daun sirih, saya membersihkannya dengan air rebusan daun sirih dan daun-daun lain.¹¹⁹

MF diculik oleh anggota milisi Laksaur, PS206, dan dibawa ke Kodim.¹²⁰ Setelah di sana sebentar, MF dan pengungsi-pengungsi lain dipindahkan ke Wemasa, Timor Barat. Pada 21 Oktober 1999 ia diserang oleh anggota milisi Laksaur, PS210. Pada malam itu, dua orang anggota milisi Laksaur, PS194 dan PS190, memaksanya masuk ke sebuah kendaraan. Mula-mula mereka mengundang MF ke pesta dengan alasan di sana ia dapat bertemu dengan suaminya, tetapi ketika ia menolak mereka mendorongnya masuk ke mobil itu. Di mobil itu sudah ada seorang perempuan lain. "Waktu itu saya berkata pada orangtua saya, 'Kalau saya tidak pulang besok pagi, berarti saya sudah mati.'" Di jalan simpang Wemasa, PS190 memerkosa MF sedang PS194 memerkosa perempuan yang satu lagi.

Pemeriksaan dan perbudakan seksual yang dialami oleh perempuan-perempuan yang lolos dari pembantaian di Gereja Suai menunjukkan unsur-unsur dari satu pola:

- kerja sama antara pasukan keamanan Indonesia dan milisi pada waktu pembantaian itu dan sesudahnya;
- penempatan korban-korban di Kodim Suai, sekolah, dan di tempat-tempat lain dengan dijaga oleh pasukan keamanan;
- personel milisi dan kepolisian tanpa ada halangan dapat mendatangi perempuan-perempuan yang tinggal di tempat-tempat tersebut;
- pasukan keamanan dan kepolisian tidak melindungi perempuan-perempuan itu dari kejahatan seksual.

154. Seperti digambarkan oleh kesaksian-kesaksian mengenai pemerkosaan dan perbudakan seksual menyusul pembantaian di Gereja Suai, kekerasan seksual tidak berhenti ketika pengungsi-pengungsi berada di tempat transit dalam perjalanan menuju Timor Barat atau setelah ditempatkan di sana. Sebaliknya, perempuan tetap rentan menghadapi kekerasan seksual begitu mereka dipindahkan dari desa asal mereka. Dalam konteks perpindahan penduduk besar-besaran ini, banyak perempuan yang diperkosa di tempat transit.

155. Pada September 1999 milisi Dadurus Merah Putih (DMP) memaksa NF dan yang lainnya untuk pindah ke Gedung Olah Raga (GOR) di Maliana sebagai persiapan untuk pemindahan ke Atambua. Pada pukul 04.00, di tengah-tengah persiapan itu, anggota milisi PS211 menangkap tangan NF, menyeretnya ke belakang gedung GOR dan memerkosanya. PS211 mengancam akan menyerang saudara-saudara laki-lakinya jika ia tidak menurut.¹²¹

156. OF dari *aldeia* Ira Lau, Pairara (Moro, Lautém) dipindahkan secara paksa dari rumahnya pada September 1999 oleh tujuh orang anggota TNI dari BTT yang datang ke desanya. Mereka diperintahkan menuju Lautém. Setelah tiba di Lautém, ia diancam dengan sebilah sangkur dan sebilah pedang kemudian diperkosa:

Ketika menunggu kapal di pantai Lautém, dua orang anggota TNI yang tidak saya kenal mendatangi saya. Mereka bersenjata bayonet dan pedang. Mereka mengancam saya dan anak-anak saya dengan senjata mereka. Mereka bergantian memerkosa saya. Saya pasrah agar mereka tidak membunuh anak-anak saya.¹²²

157. OF kemudian dinaikkan ke sebuah kapal yang menuju ke Timor Barat bersama dengan keempat anaknya dan orang-orang lain dari desanya.

158. Di bagian lain dari wilayah Timor-Leste, di wilayah kantong Oecussi, seorang anggota milisi Sakunar memerkosa PF pada September 1999 ketika suaminya diharuskan mendaftarkan diri sebagai pengungsi. PF memberikan kesaksian kepada Komisi dalam Audiensi Publik Nasional mengenai Perempuan dan Konflik yang diadakan pada April 2003:

PS212, komandan milisi Sakunar di Lela-Ufe, dan PS213, anggota milisi Sakunar, memberikan informasi palsu kepada suami saya...agar secepatnya mendaftarkan diri untuk pindah ke suatu tempat yang bernama Oelbinose di Timor Barat. Kedua orang itu mengancam, "Siapa yang tidak ikut, ia akan hancur di dalam rumah." Setelah suami saya dan rekannya pergi, datanglah kedua orang tersebut ke rumah saya. PS212...masuk...dan menuduh bahwa selama ini saya yang memasak untuk José Poto yang seorang klandestin...Tanpa berbicara lebih lanjut, ia langsung menyeret saya ke luar rumah...PS213 tetap di dalam rumah bersama kelima anak saya...yang menangis histeris.

Saya takut dan menangis karena di rumah adat itu hanya kami berdua. Saya berkata kepadanya, "Tolong, Anda jangan berbuat begini karena saya sudah menikah." Namun PS212 mengeluarkan sebuah pisau dan menodongkannya pada dada saya. Perasaan takut yang begitu dalam mengakibatkan saya kencing dalam sarung. Dengan gemetar, saya berkata lagi, "Kalau Anda mau, silakan Anda mengambil kambing di dalam kandang." Namun ia tidak menghiraukan permohonan saya... PS212 menarik dan memeluk saya begitu erat sehingga menyebabkan saya tidak bisa bergerak. Ia mendorong saya sampai tersandar di pojok dinding...dan dengan telanjang ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saya dengan cara memaksa. Ia melakukan perbuatan ini sangat lama.¹²³

159. Kamp pengungsi di Timor Barat tidak memberikan perlindungan dari pemerkosaan, terutama untuk orang-orang yang telah dipindahkan dengan paksa dan ditempatkan bersebelahan dengan para anggota milisi yang membawa mereka ke sana. Pada 14 September 1999, QF dan empat orang temannya dianiaya di Wedare (Suai, Covalima), tempat mereka sedang menyembunyikan diri. Mereka dibawa dari Wedare oleh anggota milisi bernama PS214 dan empat orang temannya ke pos Mahidi di Betun, Timor Barat. QF dan teman-temannya ditahan di sana selama tiga hari dan tiga malam. Kemudian seorang Binpolda (Bintara Polisi Desa) bernama PS401 membawa QF dari pos milisi di Betun ke Wemata (Belu, Timor Barat), dan memerkosanya di sana.¹²⁴

160. Pada September 1999, RF dan ketiga anaknya mengungsi ke Haliulun, Atambua. Suami dan anak laki-lakinya tetap berada di Timor-Leste. Ketika di Haliulun, seorang milisi Aitarak yang bernama PS216 mengajaknya tidur dengan menawarkan uang sebesar Rp20.000. Karena RF menolak, P216 mengancamnya dengan parang dan memerkosanya. Pemerkosaan ini disaksikan oleh seorang saksimata.¹²⁵

161. SF dari Tilomar, Covalima, mengingat pengalaman yang mirip terjadi pada September 1999. Menurut kesaksian SF, suaminya telah lari ke hutan karena takut diserang oleh milisi Laksaur. Di bawah ancaman senjata rakitan,^{*} SF diperkosa oleh salah satu dari tiga orang milisi di tempat tinggalnya sendiri (di pengungsian):

Pada 10 September 1999, di Manumutin, Betun [Belu, Timor Barat], tiga orang milisi Laksaur—PS217, PS218, dan PS219—datang ke tempat tinggal saya [tempat pengungsian di Betun]. Mereka membawa senjata rakitan dan pedang. PS218 dan PS219 berkata kepada saya bahwa mereka bertiga akan perkosa saya. Kemudian saya menjawab PS219: "Kamu sudah kawin dengan saudara ibu saya

^{*} Penggunaan senjata rakitan sangat umum di kalangan milisi pada 1999. Untuk foto dan keterangan mengenai bagaimana pistol berlaras tiga dirakit oleh milisi, lihat Lampiran 3 dan 4 dalam Karen Campbell-Nelson, Yooke Adelina Damapolii, Leonard Simanjuntak, dan Ferderika Tadu Huntu, *Perempuan dibawa/h Laki-laki yang Kalah: Kekerasan terhadap Perempuan Timor Timur dalam Kamp Pengungsian di Timor Barat*, JKPIIT dan PIKUL, Kupang, tanpa tahun, halaman 247 dan 249.

dan saya memanggilmu paman, mengapa kamu harus perkosa saya, anak kamu?” Dari mereka bertiga hanya PS219 yang berhasil perkosa saya. PS219 memegang kedua tangan saya dengan posisi ke belakang dan menyeret saya keluar dari rumah, kemudian ia membanting saya ke tanah dengan posisi kepala di sebelah barat dan kaki di timur. Setelah ia melucuti pakaian saya, kemudian ia perkosa saya...Saat perkosa saya, PS219 menodong senjata rakitan yang dibawanya ke dada saya. Setelah kejadian ini TNI datang dari Atambua memaksa kami [termasuk pengungsi-pengungsi yang ada di wilayah itu] untuk berangkat ke Atambua. Dengan terpaksa saya ikut dengan para pengungsi lain ke Atambua, sebab suami saya masih tinggal di Suai [ia telah lari ke hutan]. Setelah itu saya tidak diganggu lagi.¹²⁶

Perbudakan seksual

162. Perbudakan seksual adalah tindakan ilegal menurut larangan umum tentang perbudakan.¹²⁷ Pelapor Khusus PBB mengenai Bentuk-bentuk Perbudakan Masa Kini mendefinisikan perbudakan seksual sebagai “status atau kondisi seseorang yang kepadanya dilakukan semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual.” Lebih lanjut ia menjelaskan:

Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi di mana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk “menikah”, memberikan pelayanan rumahtangga atau bentuk kerja paksa lainnya yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa, termasuk pemerkosaan oleh pengeksploitasinya.¹²⁸

163. Perbudakan seksual dalam konflik bersenjata internasional atau pendudukan adalah suatu pelanggaran terhadap Pasal 27 Konvensi Jenewa IV dan merupakan pelanggaran berat terhadap konvensi tersebut (Pasal 147). Tindakan ini juga merupakan suatu kejahatan terhadap umat manusia jika dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil.

164. Komisi telah menerima bukti kuat mengenai kasus-kasus dalam jumlah yang berarti yang bisa digolongkan sebagai perbudakan seksual. Banyak dari kasus-kasus tersebut mencakup praktik-praktik yang cukup mencolok dari segi kesamaannya. Sejumlah kecil kasus melibatkan anggota partai-partai politik Timor-Leste sebagai pelaku. Dalam mayoritas besar kasus, anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia adalah pelaku yang utama. Komisi mengidentifikasi tiga pola utama perbudakan seksual.

165. Satu praktik umum yang dilakukan tentara Indonesia adalah menahan perempuan Timor-Leste di instalasi militer. Pemilikan dalam kasus-kasus ini bersifat perorangan atau kelompok. Dengan kata lain, perempuan-perempuan dapat diperkosa berulang kali oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok pelaku. Penahanan mereka didukung secara logistik sebagai bagian dari operasi militer sehari-hari dengan sepengetahuan komandan militer setempat. Grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara tindakan penahanan dengan tindakan perbudakan seksual yang dilaporkan dari seluruh periode konflik.



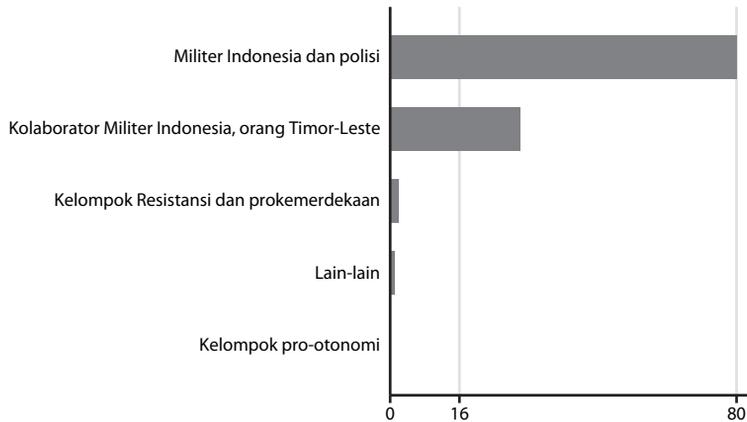
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

166. Dalam perbudakan seksual militer bentuk kedua, perempuan tidak harus secara fisik ditahan dalam instalasi militer. Alih-alih, perempuan dipanggil jika diperlukan oleh para anggota militer untuk tujuan seksual. Sesungguhnya perempuan ini dianggap sebagai milik suatu kesatuan militer dan oleh karenanya harus memberikan pelayanan seksual untuk para anggota kesatuan tersebut jika dan pada saat diminta untuk melakukannya. Kasus-kasus ini juga melibatkan penggunaan instalasi militer. Dalam beberapa kasus, nama seorang perempuan dicantumkan pada sebuah daftar khusus dan informasi mengenai ketersediaan layanan seksual dari perempuan tersebut diteruskan dari satu batalion ke batalion lain ketika terjadi pergantian pasukan tentara di suatu tempat.

167. Bentuk ketiga perbudakan seksual adalah seorang anggota pasukan keamanan menjalankan kepemilikannya terhadap seorang perempuan dalam situasi rumahtangga, biasanya di rumah perempuan yang dimaksud. Dalam perbudakan seksual seperti ini, pelakunya sering menyampaikan ancaman mati terhadap si perempuan atau keluarganya jika ia tidak bersedia berhubungan seksual dengan si pelaku, dan sering juga memintanya melakukan pekerjaan rumahtangga yang lain. Dalam konteks Timor-Leste ancaman semacam itu bisa saja terjadi jika permintaan

tidak dipenuhi. Dalam beberapa kasus, seorang perempuan harus memilih antara pengaturan yang eksklusif ini atau pemerkosaan oleh kelompok secara berulang. Korban dari pelanggaran yang berpola umum semacam ini sering secara umum disebut “istri simpanan TNI” atau “istri TNI”. Namun, kenyataannya, tidak pernah terjadi pernikahan dan tidak ada persetujuan bebas dari korban untuk melakukan hubungan seksual dengan si pelaku.

Jumlah perbudakan seksual berdasarkan pelaku, 1974 – 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali, karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara beberapa pelaku

168. Komisi mengakui bahwa ada pernikahan yang sungguh-sungguh yang terjadi antara anggota aparat keamanan Indonesia dan perempuan Timor-Leste berdasarkan kesepakatan bersama. Perkawinan yang bersifat sukarela ini, apakah diresmikan melalui kantor catatan sipil, hukum adat (*lisan* atau *lulik* dalam bahasa Tetum), ritus keagamaan, ataupun sebuah hubungan pernikahan *de facto*, bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Komisi juga mencatat bahwa sejumlah perempuan Timor-Leste atas kehendak sendiri mengadakan hubungan dengan anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia karena sebab ekonomi. Komisi menganggap hubungan ini sebagai ikatan atas dasar suka sama suka yang bukan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia.

Perspektif korban

169. Dalam beberapa kasus situasi perbudakan seksual berlanjut selama beberapa tahun. Pemberlakuan hak milik yang berkepanjangan ini menghasilkan hal-hal yang lebih rumit lagi, terutama jika ada anak yang lahir akibat hubungan ini. Sebagian korban dikucilkan dari keluarga dan lingkungannya. Mereka menjadi tergantung secara finansial dan sosial kepada anggota militer yang mengontrolnya, dan nyaris tidak ada pilihan yang nyata untuk keluar dari situasi tersebut.

170. Para korban perbudakan seksual menggunakan berbagai macam ungkapan penghalusan untuk menggambarkan pengalaman mereka. Ada yang hanya menceritakan tindak pemerkosaan pertama yang dialami dan menambahkan kemudian, “ini terjadi terus selama satu tahun.” Ada juga yang mengatakan terangnya bahwa mereka dijadikan “pelacur” (“lonte” atau “*feto nona*” [lihat catatan kaki pada paragraf 27]). Yang lainnya menggunakan istilah sehari-hari “istri TNI.”

171. Berbagai ungkapan penghalusan ini mencerminkan prasangka dan stereotip umum terhadap perempuan-perempuan yang menjadi korban perbudakan seksual. Apapun istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelanggaran, perbudakan seksual membebankan suatu stigma pada korbannya. Ini sering mengakibatkan pengucilan oleh keluarganya, cemoohan dari lingkungannya, dan diskriminasi terhadap perempuan tersebut dan anak-anaknya, termasuk yang dilakukan oleh para pejabat gereja. Meski ada kendala-kendala di atas, perempuan memecahkan kebisuan dan dengan keberanian yang luarbiasa mengungkapkan kepada Komisi perbudakan seksual yang mereka alami.

Perbudakan seksual dalam konteks konflik antarpantai

172. Komisi menemukan bukti mengenai perbudakan seksual yang terjadi dalam konteks konflik antarpantai politik pada 1975.

173. TF1 dari Selo Kraik (Aileu Vila, Aileu) memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai perbudakan seksual yang terjadi pada TF yang dimulai pada saat TF1, TF, dan tujuh orang lainnya ditahan oleh Fretilin. Pada Agustus 1975, TF1, tiga perempuan lain, dan lima laki-laki ditangkap dari kebun mereka oleh pasukan Fretilin dari desa lain. Karena dicurigai sebagai simpatisan UDT dan dituduh menyembunyikan senjata, mereka dipukuli dan diinterogasi di markas Fretilin sebelum dibawa ke penjara Aissirimou di Aileu tempat mereka diinterogasi lebih lanjut. Mereka pada akhirnya dibebaskan, tetapi disuruh menumbuk padi dan membersihkan kebun [untuk ditanami] selama satu bulan. Pada satu malam, PS220, seorang anggota Fretilin, memasuki kamar tempat keempat perempuan itu tidur dan mengambil TF secara paksa. TF1 mengatakan:

PS220 masuk ke kamar tidur [yang kami tempati] dan memegang dengan erat mulut TF dan membawa ke kamar tidurnya. Lalu menyuruh tidur bersama dengannya. Akhirnya secara terus-menerus sampai menikahi TF dan mendapatkan anak.¹²⁹

174. UF memberikan kesaksian mengenai pembunuhan suaminya pada 1978 di Desa Maulau (Maubisse, Ainaro) oleh tiga anggota partai UDT yang dikenal bernama PS221, PS222, dan PS223. Setelah pembunuhan itu, PS221 memaksa UF melakukan hubungan seksual dengan ancaman akan dibunuh jika ia menolak. UF melahirkan seorang anak dari hubungan tersebut.¹³⁰

175. Pada Mei 1977, VF dan anggota keluarganya ditahan oleh Fretilin atas kecurigaan pengkhianatan. VF memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai penahanan dan penyiksaan oleh Fretilin yang dialami dan disaksikannya ketika

berada di Renal (*Reabilitação Nacional*, penjara Rehabilitasi Nasional) di Remexio (Aileu).^{*} Pada akhir kesaksiannya, VF menyebutkan bahwa salah seorang tahanan perempuan dipaksa menikah dengan seorang anggota Fretilin:

Kami berenam perempuan ditahan di sana [di tempat penahanan Fretilin di Roluli] selama dua minggu. Selama itu saya sering dipukul, ditendang, dan diinterogasi. Mereka membagi kami [para tahanan] dalam dua kelompok: laki-laki dan perempuan. Kelompok kami dibawa ke tempat penahanan baru yang dikenal bernama Renal di Remexio, Aileu. Dalam perjalanan tangan perempuan diikat ke belakang, kemudian semua perempuan diikat bersama dengan satu tali panjang yang ditarik oleh Fretilin...Hampir semua orang yang ditahan di Renal meninggal, termasuk semua bibi dan nenek saya. Para tahanan semua mati karena lapar... Pada 25 Juni 1978 kami lari terpancar meninggalkan Renal karena tentara Indonesia telah mengepung dan menyerang penduduk di wilayah itu. Hari itu juga kami mengungsi ke Roluli. Di sanalah kami berempat [perempuan] berpisah untuk tinggal dan memasak untuk beberapa komandan Fretilin. Teman saya VF tinggal dengan Komandan PS224, WF tinggal dengan Komandan PS225, sementara XF dan saya tinggal dengan Komandan PS226...Setelah itu kami melanjutkan perjalanan kami masing-masing bersama dengan para komandan...Pada 19 Januari 1979, kami semua, termasuk Komandan PS226, menyerah di Metinaro [Manatuto]. Sebelum menyerah, teman saya XF dipaksa kawin dengan seorang anggota Falintil bernama PS227.¹³¹

Perbudakan seksual selama masa pendudukan Indonesia (1975-1999)

176. Komisi menemukan bukti bahwa telah terjadi perbudakan seksual pada masa pendudukan Indonesia. Kesaksian para korban dan saksi mata mengungkapkan bahwa kejadian perbudakan seksual meningkat dalam periode serangan militer besar-besaran Indonesia. Peningkatan yang berarti dalam jumlah kasus perbudakan seksual terjadi pada akhir dasawarsa 1970-an, kemudian pada 1982 dalam periode *levantamento* (kebangkitan) dan pada 1999 seputar masa Jajak Pendapat.

^{*} Renal adalah kamp rehabilitasi Fretilin di pedalaman pada dasawarsa 1970-an setelah invasi. Renal digunakan untuk menahan dan "mendidik kembali" anggota-anggota Fretilin mengenai ide-ide politik, tetapi di tempat ini juga terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan.

Perbudakan seksual pada masa invasi dan operasi-operasi skala besar (1975-1984)

177. Basis data Komisi mengenai kasus-kasus perbudakan seksual yang terdokumentasi menunjukkan bahwa 63% kasus terjadi dalam periode invasi dan operasi-operasi militer skala besar antara 1975 dan 1984. Kasus-kasus perbudakan seksual pada periode ini bisa dibagi menjadi dua pola yang berbeda: perbudakan seksual militer dan perbudakan seksual dalam rumah tangga.

A. Perbudakan seksual militer di instalasi militer

178. Komisi telah mengumpulkan bukti kuat yang menunjukkan bahwa telah terjadi praktik perbudakan seksual yang ditoleransi dan didukung oleh militer Indonesia.¹³² Dalam kasus-kasus yang korbannya ditahan di instalasi militer selama masa perbudakan seksual, jelas bahwa kesalahan terletak pada militer.

179. YF menyampaikan kepada Komisi mengenai pengalaman penahanan dan perbudakan seksual ketika ia berusia sekitar 15 tahun. Pada saat Militer Indonesia melakukan invasi, YF dan keluarganya, yang dikenal sebagai pendukung Fretilin, melarikan diri ke hutan dari Desa Lauana (Ermera). Pada 1977, YF, keluarganya, dan seorang perempuan tua bernama YF1 ditangkap oleh tentara Indonesia. Mereka dibawa ke Koramil Letefoho di Ermera untuk diinterogasi dan kemudian diperintahkan kembali ke hutan untuk membujuk anggota Fretilin yang lain agar menyerah. Waktu itu, saudara laki-laki YF, yang telah tertangkap dan ditahan bersamaan dengan YF, berhasil mencegahnya ikut serta dalam operasi. YF kembali ke rumahnya di Lauana. Akan tetapi, YF1 ikut dalam operasi dan tertembak punggungnya oleh militer. Beberapa lama kemudian, tentara mendatangi rumah YF dan menangkapnya lagi.

Tentara menangkap kembali saya dan sepupu saya ZF, kami dibawa dari Lauana ke Koramil di Letefoho. Di Letefoho dua orang tentara, yang namanya saya sudah lupa, memaksa ZF dan saya untuk berhubungan seksual dengan mereka di Koramil. Mereka mendorong kami ke dalam dua kamar terpisah dan mengancam kami, "Kalian Fretilin kalau tidak mau dengan kami, kami akan tembak mati." Karena kami ingin hidup, kami pasrah saja dengan tentara yang memerkosa kami.¹³³

180. Setelah para prajurit itu memerkosa dua orang gadis tersebut, mereka memaksa kedua gadis itu untuk berdiri di depan tiang bendera di bawah terik matahari. Mereka menampar kedua gadis itu dan mengancam akan menembak mereka. Kedua gadis itu beruntung karena seorang Timor yang menjadi tentara di Koramil menghentikan perbuatan ini. Setelah empat hari berada di Koramil Letefoho, YF dipindahkan ke Kodim Ermera di mana ia ditahan selama satu tahun (1977-1978). YF menceritakan apa yang dialaminya di Kodim Ermera:

Pemeriksaan berlanjut dan saya tidak diperbolehkan bertemu dengan keluarga karena kami semua Fretilin. Selama ditahan di Kodim itu, seorang Peltu [pembantu letnan satu], yang namanya saya lupa, terus-menerus mengganggu saya dan memperlakukan saya seperti pelacur.¹³⁴

181. YF juga memberikan kesaksian bahwa ada dua perempuan lain yang ditangkap di Hauhei (Hatolia, Ermera) yang juga berulang kali diperkosa oleh tentara di Kodim Ermera. YF melahirkan dua orang anak, salah satunya meninggal dunia.

182. Dalam banyak kasus perbudakan seksual militer, sumberdaya militer dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan seksual ini. Seperti YF yang ditangkap dan ditahan di luar hukum, AG mengisahkan kepada Komisi mengenai pemeriksaan dan perbudakan seksual yang dialaminya, pertama di Koramil Hatolia, Ermera, dan kemudian di Kodim Maliana, Bobonaro:

Pada 1977 seorang tentara Indonesia, PS228, datang ke rumah saya, mengancam orangtua saya dan membawa saya ke Koramil Hatolia... [di sana ia] menelanjangi saya, menidurkan saya di atas tempat tidur, dan memperlakukan saya seperti pelacur. [Ini berlanjut] selama satu tahun.¹³⁵

183. Setelah masa tugasnya selesai, PS228 meninggalkan AG. Dua tahun kemudian, ia ditugaskan kembali ke Timor-Leste, kali ini di Kodim Maliana. Ia menyuruh dua orang Hansip pergi mengambil kembali AG. Sekali lagi, di bawah ancaman mati, orangtua AG harus menyerahkan anaknya kepada tentara Indonesia. AG dibawa ke asrama tentara Kodim Maliana dan kembali dipaksa memasuki situasi perbudakan seksual selama tiga tahun. Ia melahirkan dua orang anak. PS228 mengklaim AG sebagai hak milik seksual pribadinya selama bertahun-tahun. Fakta bahwa ia memerintahkan dua orang Hansip untuk mengambil AG dari Subdistrik Hatolia, yang berada di bawah kekuasaan Kodim Ermera, untuk membawanya ke Kodim Maliana, jelas menunjukkan penggunaan sumberdaya dan kewenangan militer untuk melakukan kejahatan ini. (Lihat pula kasus PS229, Kepala Seksi Intelijen Kodim Ainaro, yang diuraikan dalam paragraf 193.)

184. Perempuan tidak hanya ditahan untuk perbudakan seksual di Kodim dan Koramil, tapi juga di pos-pos militer yang tersebar di seluruh Timor-Leste. BG menyampaikan penahanan dan perbudakan seksual terhadapnya di pos BTT 145 di Hatolia:

Pada 1977 di Hatolia kota, komandan Batalion 145, PS230 dari Sumatra Selatan, mengancam akan menembak kakak saya dengan senjata untuk memaksa saya pergi ke pos TNI [ABRI]. [Di sana ia] menjadikan saya seperti seorang pelacur selama satu tahun sampai akhirnya saya melahirkan seorang anak. Waktu itu saya masih kecil...¹³⁶

185. BG juga memberikan kesaksian bahwa seorang perempuan lain, yang ia kenal sebagai CG, juga dipaksa tinggal di pos Yonif 145. Seperti BG, CG direkrut paksa dalam perbudakan seksual dan pada akhirnya melahirkan seorang anak. Pada saat Yonif 145 meninggalkan Timor-Leste, kedua perempuan tersebut dan dua orang anak mereka ditelantarkan begitu saja. Kenyataan bahwa kedua perempuan ini berada dalam situasi perbudakan seksual di pos militer itu sampai kedua perempuan tersebut hamil dan masing-masing melahirkan seorang anak memperlihatkan bahwa tindakan ini diketahui dan dibiarkan oleh militer.

186. Perempuan yang diketahui punya peran dalam Falintil, perempuan yang menyerah setelah melarikan diri ke gunung dan, khususnya, perempuan yang diketahui sebagai istri pemimpin Falintil, semuanya rentan terhadap perbudakan seksual. DG, yang dua tahun sebelumnya menyaksikan pemerkosaan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap saudara perempuannya E di Lauana, Ermera, menjadi pejuang gerilya dan menikah dalam suatu upacara sipil dengan seorang Komandan Falintil bernama DG1. Mereka terpisah karena pertempuran dan pada 1977 DG mendengar bahwa suaminya telah terbunuh di Aidea, Aiasa (Bobonaro, Bobonaro). Setahun kemudian DG menyerah di Cailaco (Bobonaro). DG mengatakan kepada Komisi:

Karena ABRI tahu saya istri Komandan DG1, komandan Koramil Hatolia asal Sulawesi bernama PS231 memaksa saya dan memperlakukan saya seperti pelacur yang melayaninya selama satu tahun...[Kemudian] ia meninggalkan saya dengan seorang anak hasil dari hubungan ini.¹³⁷

187. EG1 memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai perbudakan seksual yang menimpa saudara perempuannya EG. Menurut kesaksian yang ia berikan, EG dijadikan sasaran karena saudara laki-laknya seorang komandan Falintil. Pada 1979, setelah empat anggota keluarganya terbunuh oleh bom-bom Indonesia yang dijatuhkan di *aldeia* Fatuacan, Fahinehan (Fatuberliu, Manufahi), EG1 dan keluarganya menyerahkan diri kepada kepala *aldeia* Riamori, di Desa Fahinehan, yang bernama PS233. Kakak laki-laki EG1, EG2, seorang komandan Falintil, juga menyerah. EG1 menyampaikan kepada Komisi:

Kepala desa [Fahinehan] memberitahu Yonif Linud 100 bahwa EG2 adalah komandan berpangkat tinggi di hutan dan karena itu ia harus dibunuh, atau, kalau tidak, TNI [ABRI] harus mengambil atau kawin dengan saudara perempuannya. Kemudian mereka mengambil saudara perempuan saya, EG. Mereka membawanya ke pos tentara dan memerkosanya secara bergantian. Mereka terus melakukan hal ini sampai 1980 ketika mereka [Linud 100] selesai tugas dan digantikan oleh Batalion 643. Mereka pun mengambil saya untuk menjadi TBO di pos tersebut...Saya melihat dengan mata kepala sendiri pemerkosaan yang dialami saudara perempuan saya. Waktu mereka meninggalkan Fahinehan, baru ia dilepaskan [dan diizinkan] pulang ke rumah.¹³⁸

188. Pada 1979 FG, yang pada waktu itu berusia 14 tahun, menyerah kepada tentara Indonesia di Desa Mulo (Hato Builico, Ainaro). Bersama dua teman lain, ia ditahan di sebuah ruangan di Koramil Hato Builico. Di sana, komandan Koramil dan wakilnya, masing-masing dikenal bernama PS402 dan PS403, menelanjangi dan memerkosa mereka. FG bersaksi kepada Komisi:

Mereka memerkosa saya dan teman-teman setiap malam selama satu minggu penahanan kami. Pertama kali diperkosa saya berdarah dan tidak bisa jalan.¹³⁹

189. FG melahirkan seorang anak sebagai akibat dari pemerkosaan tersebut. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa dua tahun kemudian seorang anggota ABRI, PS404

datang [ke rumah saya] dan memaksa saya mengawininya...saya ketakutan karena situasinya memanas di mana banyak orang yang ditahan...[P]ada akhirnya [saya pasrah saja dan] melahirkan seorang anak dari perkawinan ini.¹⁴⁰

190. Dalam kasus ini, FG dan teman-temannya adalah korban pemerkosaan berulang-ulang ketika ditahan di Koramil Hato Builico, dan dua tahun kemudian FG menjadi korban perbudakan seksual dalam rumahtangga.¹⁴¹

191. Dalam beberapa kasus, perbudakan seksual mencakup perekrutan paksa ke dalam operasi-operasi militer untuk mencari Falintil, seperti yang dialami oleh GG. Pada 1979, dua anggota TNI dari Yonif 121, Kopral PS234 dari Sumatra Selatan dan seorang laki-laki tak dikenal, menahan GG dari rumahnya di *aldeia* Nun Sorau, Ma'abat (Manatuto, Manatuto). Mereka membawanya ke Kodim Manatuto. "Jika saya menolak, bapak saya diancam akan dibunuh. Dengan perasaan takut, akhirnya saya pasrah." Setelah diperkosa di lantai, keesokan harinya GG dipulangkan. "Mulai dari situlah saya diperlakukan sebagai 'istri penghiburnya' selama enam bulan, hingga saya memperoleh seorang anak laki-laki." Ketika GG sedang mengandung ia dipaksa masuk hutan dengan membawa 5 kg beras, makanan, rokok, dan dua pucuk surat. Surat-surat itu—satu dari Kodim dan yang lain dari Yonif 121—berisi seruan kepada para anggota Fretilin yang masih berada di hutan untuk menyerahkan diri. Secara tak sengaja GG bertemu dengan beberapa anggota Fretilin yang mengenalinya tapi ia ditahan di pos komando Fretilin selama lima hari. Akhirnya GG berhasil melarikan diri dan kembali untuk melapor ke Kodim di Manatuto. Beberapa hari kemudian ia dipaksa pergi bersama dengan satu pasukan tentara yang melakukan pencarian tempat-tempat persembunyian Fretilin, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Keesokan harinya ia harus mengikuti operasi militer lain:

Tiga anggota TNI Batalion 121, saya tidak kenal, mengancam saya dengan pistol dan granat dengan tujuan agar saya mengantar mereka masuk ke hutan untuk mencari oposisi bersenjata Fretilin. Karena saya menolak, saya ditendang tiga kali di bagian paha hingga saya jatuh, saya dalam keadaan hamil satu bulan. Kemudian saya disuruh berdiri dan terus dipaksa [berjalan].¹⁴²

192. Pada akhirnya GG kembali ke Desa Cribas (Manatuto, Manatuto) dengan Yonif 121 dalam iring-iringan tiga kendaraan Hino. Ia dipaksa mendaki gunung-gunung dan bermalam di hutan dengan para prajurit tapi mereka tidak menemukan satu orang musuh pun. Aspek perbudakan seksual dalam kasus ini jelas: penculikan dari rumahnya, ancaman terhadap keselamatan keluarganya, pemerkosaan, dan keterlibatan dalam operasi-operasi militer yang bukan atas kehendaknya sendiri. Yonif 121 telah menjalankan hak kepemilikan atas GG meskipun hanya Kopral PS234 yang punya akses seksual padanya.

193. Dalam kasus berikut ini, seorang Kepala Seksi Intelijen bisa memindahkan dua orang tahanan perempuan dari Koramil di Hato-Udo ke Kodim di Ainaro semata-mata untuk keperluan seksual pribadinya. Pada 1980, MB dan NB menyerah di Betano (Same, Manufahi) dan dibawa ke Koramil di Hato-Udo. Mendengar kabar tertangkapnya mereka, Kepala Seksi Intelijen (Kasi I Intel) dari Kodim Ainaro, bernama PS229, datang untuk menginterogasi mereka. Setelah PS229 kembali ke Ainaro, ia memerintahkan dua orang Hansip untuk mengambil para perempuan tersebut dari Koramil Hato-Udo dan membawa mereka ke Kodim Ainaro:

Kami mendekam di sana, [kemudian] Kasi I Intel PS229 memanggil saya dan NB ke [tempatny] untuk memakai kami berdua. Dalam satu minggu, ia memerkosa kami selama lima hari dan lima malam. Ia melakukan hal ini terhadap kami selama satu tahun. Saya melahirkan seorang anak dari hubungan ini.¹⁴³

B. Perbudakan seksual oleh militer di luar instalasi militer

194. Komisi telah menemukan bukti mengenai perbudakan seksual di mana para perempuan yang tidak ditempatkan di dalam basis militer masih dipanggil sewaktu-waktu oleh ABRI untuk penganiayaan seksual oleh para anggota prajurit. Meskipun tidak secara fisik ditahan di kompleks militer, korban-korban seperti itu berada di bawah kontrol mutlak militer. Dalam beberapa kasus, nama para perempuan tercantum dalam suatu daftar atau dokumen yang disimpan oleh militer yang mengharuskan mereka melayani anggota militer. Daftar atau dokumen ini diteruskan dari satu kesatuan ke kesatuan lain. Seperti diungkapkan oleh HG dari Lautém kepada Komisi:

Karena nama saya sudah tertulis di Kodim sebagai orang yang bisa “dipakai”, maka setiap kali ada pergantian [pasukan] saya selalu diambil oleh salah seorang anggota ABRI yang menginginkan saya. Saya selalu mengikuti keinginan mereka karena saya takut dibunuh.¹⁴⁴

195. IG adalah seorang korban perbudakan seksual militer selama satu tahun yang berakhir ketika ia setuju menjalani perbudakan seksual dalam rumahtangga dengan seorang Babinsa. Pada 1977 IG diambil dari rumahnya di *aldeia* Uaturidi, Bahú (Baucau, Baucau) oleh kesatuan tentara Resimen Tim Pertempuran (RTP)

15 dan Yonif 330. Ia diinterogasi dan disiksa, “[Mereka] menyundut bibir saya dengan puntung rokok, menampar saya, menendang saya...kemudian menyuruh saya pulang.” IG ditangkap lagi satu tahun kemudian, kali ini di *aldeia* Anawaru, Caibada Uaimua (Baucau, Baucau) dan dibawa ke markas ABRI Baucau. “Di markas TNI [ABRI], para tentara memerkosa saya berkali-kali selama empat hari. Jika saya menolak [mereka bilang bahwa mereka] akan menembak mati saya.” Setelah empat hari IG dibebaskan dan dipulangkan ke rumahnya di Anawaru:

Tapi...setiap pagi pukul delapan saya dipanggil oleh TNI [ABRI] untuk menemani tentara-tentara seperti suami-istri. Kalau saya menolak saya akan dibunuh. Semua ini terjadi karena pada waktu suami saya masih bersama gerilyawan Falintil.¹⁴⁵

196. Keadaan ini berlanjut selama satu tahun. Pada 1979, IG dipukuli ketika ia menolak seorang tentara Indonesia yang ingin berhubungan seks dengannya. “Saya sangat tertekan pada saat itu, akhirnya dengan sangat terpaksa saya memasrahkan diri pada seorang Babinsa yang mau menikahi saya.” Ia melahirkan dua orang anak dari hubungan tersebut.¹⁴⁶

197. G1 memberikan kesaksian mengenai perbudakan seksual yang dialami oleh saudara perempuannya pada 1978 ketika G1 bersama keluarganya menyerahkan diri kepada Yonif 122 di Desa Lauana (Letefoho, Ermera). Pada waktu itu G dipaksa menjadi hak milik seksual Yonif 122. Ia baru berusia 17 tahun. G1 menyampaikan kepada Komisi:

Waktu kami menyerah, kakak saya G masih gadis. Tentara dan Hansip memerkosa G. Kapan saja tentara butuh menyalurkan nafsu seks mereka, mereka akan membawa G ke pos untuk “dipakai”. Karena pelanggaran seksual ini sampai sekarang G tidak pernah menikah — ia hidup sendirian.¹⁴⁷

C. Perbudakan seksual dalam rumahtangga

198. Komisi menerima bukti tentang kasus-kasus perbudakan seksual di mana perempuan, di bawah ancaman oleh personel keamanan bersenjata, dipaksa melakukan hubungan seksual jangka panjang dalam situasi rumahtangga. Dalam banyak kasus perbudakan seksual dalam rumahtangga yang dilaporkan ke Komisi, korban diperkosa sebelum dipaksa menjalankan hubungan seksual jangka panjang dengan pelakunya.

199. Komisi telah menerima bukti yang menguatkan mengenai kasus perbudakan seksual yang dialami oleh JG. Pada 1980 ABRI membagikan tepung jagung kepada penduduk Subdistrik Welaluhu (sekarang dikenal sebagai Fatuberliu) di Distrik Manufahi. Dua laki-laki dan tiga perempuan, JG, KG, LG, ditahan dan disiksa. Tiga perempuan tersebut dipisahkan dari tahanan yang lain, ditempatkan di sebuah rumah dekat Koramil dan diperkosa berkali-kali oleh Danramil, PS239, dan wakilnya. JG diperkosa selama hampir 40 hari oleh Wakil Danramil itu. Dua minggu sesudah JG dibebaskan, Wakil Danramil mendatangi rumahnya dan memaksanya

“menikah” dengannya. Hubungan ini berlanjut selama satu bulan sampai Wakil Danramil itu selesai bertugas di Timor-Leste.¹⁴⁸

200. MG memberikan kesaksian kepada Komisi mengenai pemerkosaan dan perbudakan seksual dalam rumahtangga yang ia alami di rumahnya sendiri pada 1982 ketika ia baru berusia 15 tahun. Kejadian ini, yang terjadi di Desa Manlala (Soibada, Manatuto), dengan jelas menunjukkan ketidakberdayaan penduduk setempat dan pemerintah sipil dalam menghadapi aparat keamanan Indonesia.

Pada 1982, waktu itu saya pulang dari sekolah, saya dikejar oleh [seorang anggota] Nanggala [Komando Pasukan Sandi Yudha] bernama PS240. Saya tidak kuat lari, akhirnya saya ditangkap lalu diperkosa di [suatu tempat bernama] Besarin...Sehabis saya diperkosa, beberapa jam kemudian ibu guru saya yang bernama Lourdes sampai di tempat kejadian karena diberitahu teman-teman saya...

Setelah bapak saya kembali dari kebun, dia sangat marah sehingga dia memukul saya...Mengingat usia saya masih kecil bapak saya tidak rela melihat keadaan saya begitu. Sampai bapak saya berusaha melaporkannya kepada camat yang bernama PS241, untuk melarang PS240 jangan berhubungan dengan saya. Di situlah PS240 itu marah, lalu memukul bapak saya sampai berdarah, terus ditendang sampai bapak saya mengalami sakit. Setelah satu minggu kemudian PS240 ke rumah lagi dan sempat bermalam. Di situlah PS240 memaksa saya untuk jadi istri penghubung, sampai saya mengandung. Setelah bayi itu lahir, dia sudah mulai menghindar, sampai [akhirnya] dia dipindahkan ke Baucau.¹⁴⁹

201. Kasus serupa dilaporkan oleh NG1. Pada 1983, ketika NG1 masih berusia 12 tahun di Desa Sananain (Laclubar, Distrik Manatuto), PS242, seorang Indonesia petugas Binpolda (Bintara Polisi Desa) sering mengunjungi rumah keluarga NG1. Suatu malam, PS242 memanggil dan menanyakan tentang kakak NG1, NG. Orangtua NG1 berusaha mencegah PS242, tetapi ia mendesak masuk ke kamar tidur NG. NG1 juga berusaha melindungi saudara perempuannya, tapi PS242 mengancam akan menembaknya. Malam itu NG diperkosa di rumahnya sendiri. Setelah malam itu, PS242 secara sepihak memutuskan bahwa ia akan sewaktu-waktu menginap di rumah itu untuk berhubungan seks dengan NG. Hubungan mereka berlanjut sampai PS242 selesai tugasnya di Sananain. NG melahirkan seorang anak akibat dari pelanggaran ini.¹⁵⁰

202. Tabel di bawah ini memberikan ringkasan mengenai beberapa kejadian perbudakan seksual dalam rumahtangga yang terjadi dalam periode ini.

Tabel 1: Ringkasan kasus perbudakan seksual dalam rumahtangga (1975-1984)

| Nomor Pernyataan HRVD | Tahun | Lokasi | Pelaku | Penjelasan singkat | Lama perbudakan seksual |
|-----------------------|-----------|--------------------------|---|---|-------------------------------|
| 01792 | 1975 | Rairobo, Atabe, Bobonaro | Polisi, namanya tidak disebutkan | Diancam akan dibakar hidup-hidup, OG1 menyerahkan anak perempuannya kepada seorang polisi. Dua anak lahir dari hubungan tersebut. | Lebih daripada satu tahun |
| 01167 | 1975-1976 | Atabae, Bobonaro | PS243, dari Sulawesi Indonesia, anggota Koramil Maliana | Sersan Satu PS243 memaksa masuk ke rumah PG. Terancam akan dibunuh, ia terpaksa menjalani hubungan seksual berkelanjutan dengannya. Seorang anak lahir dari hubungan tersebut, tapi ditinggal begitu saja oleh PS243 ketika ia pulang ke Indonesia. | Lebih daripada sembilan bulan |
| 01827 | 1975-1978 | Atabae, Bobonaro | PS126, orang Timor-Leste, Partisan | Ketika pasukan Partisan memasuki desa Aidabaleten, QG diperkosa selama lima jam oleh PS126. Selanjutnya ia dipaksa menjalani perbudakan seksual dengan PS126 hingga tiga tahun lamanya. | Tiga tahun |
| 06190 | 1976-1978 | Ermera | PS245, Bupati Ermera, orang Timor-Leste | Setelah menyerah kepada ABRI di Samara, RG dan keluarganya dibawa ke Ermera. Di sana, PS245, Bupati Ermera, memerintahkan RG berjarak dengan tiga perempuan lain. Ia memilih RG menjadi "gundik"-nya dan secara sepihak memutuskan untuk mulai berhubungan seksual dengannya. | Dua tahun |
| 07905 | 1976 | Sau, Manatuto | PS246, prajurit kesatuan artileri medan | PS246 mengancam akan membunuh orang tua SG; ia kemudian memerkosanya di rumah SG sendiri. Keadaan ini berlanjut selama tujuh bulan. | Tujuh bulan |
| 06193 | 1978 | Hatolia, Ermera | Prajurit yang namanya tidak disebutkan, anggota Yonif 721 | Dengan mengancam akan membunuh kakak laki-lakinya, seorang anggota ABRI dari Yonif 721 dengan paksa mengambil H dari desanya di Hatolia dibawa ke Dili untuk hidup dengannya. | Enam bulan |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------|---|--|-------------------------------|
| 04108 | 1978-1979 | Rotutu, Same, Manufahi | PS247, orang Indonesia, ABRI | TG diancam oleh 10 anggota Hansip yang mengatakan akan membunuh seluruh keluarganya jika ia menolak keinginan PS247. PS247 tinggal bersama TG dan keluarganya selama dua bulan. TG sedang mengandung waktu PS247 memaksanya pindah bersamanya ke Betano. Mereka tinggal di Betano sampai anaknya berusia satu tahun sebelum PS247 pulang ke Sulawesi, Indonesia. | Lebih dari satu tahun |
| 01161 | 1978-1981 | Atabae, Bobonaro | PS248, Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), orang Indonesia | PS248 mengancam akan membunuh UG jika ia menolak kemauan seksualnya. Tiga anak lahir dari hubungan ini dan ditinggalkan begitu saja ketika PS248 pulang ke Indonesia. | Tiga tahun |
| 06355 | 1979 | Raimea-Biluli, Ermera | PS249, salah seorang komandan dari Yonif 401, orang Indonesia | PS249 dan sembilan prajurit lain mendatangi rumah VG. PS249 mengancam akan membunuh saudara laki-laki VG jika ia menolak ajakannya. Ia menuruti karena khawatir akan keselamatan saudara laki-lakinya. PS249 terus memerkosakan VG di rumah itu. Akhirnya ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian meninggal. | Lebih daripada sembilan bulan |
| 01066 | 1979-1981 | Dukurai, Letefoho, Ermera | <i>Liurai</i> PS250, Kepala Desa | WG ditahan oleh PS250 dan seorang Hansip bernama PS240. Ia dipukuli lalu dipaksa menjalani perbudakan seksual dengan PS250 yang tinggal bersama WG di rumah orangtua WG. Ia melahirkan dua anak dari hubungan tersebut. | Dua tahun |
| 00566 | 1979 | Uailacama, Vemassee, Baucau | PS251, Babinsa di Vemassee, orang Indonesia | PS251 menuduh J dan ayahnya bekerja untuk Fretilin dan mengancam akan membunuh mereka. Sebagai ganti atas keselamatan nyawa mereka, PS251 membawa J dan hidup bersamanya di Koramil Vemassee. Seorang anak lahir dari hubungan tersebut. | Satu tahun |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 05212 | 1980 | Lenao, Manatuto | PS252, prajurit ABRI, orang Indonesia | Korban diperkosa di rumahnya sendiri karena diancam akan dibunuh, lalu dipaksa menjalani hubungan seksual yang berkelanjutan. Sewaktu PS252 pindah tugas ke Soibada (Manatuto) ia juga dibawa. Ia melahirkan seorang anak dari hubungan tersebut. PS252 pulang ke Indonesia. | Lebih daripada sembilan bulan |
| 03527 | 1984-1987 | Railaco Kraik, Railaco, Ermera | PS253, Babinsa, berasal dari Jawa Tengah | PS253 menyita harta benda milik XG. Pada malam itu ia mendatangi rumah XG mengancam akan membunuh anggota keluarganya. Ia diperkosa kemudian dipaksa menjalani hubungan seksual berkelanjutan di rumahnya sendiri. Ia melahirkan seorang anak dari hubungan tersebut. | Tiga tahun |

D. Perbudakan seksual dalam rumahtangga yang beruntun

203. Komisi telah menerima bukti mengenai kasus-kasus perbudakan seksual dalam rumahtangga yang terjadi secara beruntun, yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang berbeda terhadap korban yang sama.¹⁵¹ Komisi memiliki bukti bahwa kepemilikan seksual dialihkan dari seorang anggota pasukan keamanan kepada yang menggantikannya.

204. YG menjadi korban perbudakan seksual oleh tiga prajurit Indonesia secara beruntun. Pada 1980 YG hampir ditembak oleh seorang anggota kepolisian dan beberapa prajurit ABRI sewaktu ia berada di ladang bersama anak-anaknya. Dituduh bergabung dengan Falintil, YG dibawa ke Koramil Alas (Manufahi). Dalam perjalanan, mereka mengancam akan membunuhnya dan membuangnya ke sungai, tetapi tidak mereka lakukan. Di Koramil Alas, YG diinterogasi selama tiga hari. Kemudian komandan Koramil Alas, diketahui bernama PS254, memaksa YG melayani keinginan seksualnya dan pada akhirnya ia melahirkan seorang anak. Komandan Koramil tersebut meninggal tak lama setelah anak itu lahir. Pada 1982 YG lagi-lagi dipaksa terlibat dalam hubungan perbudakan seksual, kali ini dengan seorang prajurit bernama PS255. Dari hubungan ini ia melahirkan seorang bayi yang telah meninggal. Setahun kemudian, untuk ketiga kalinya, YG dipaksa melakukan perbudakan seksual dengan seorang anggota ABRI yang namanya tidak diungkapkan. Tentara itu meninggalkan YG setelah sebulan karena tugasnya telah selesai.¹⁵²

205. ZG menjadi korban perbudakan seksual yang berlangsung selama satu tahun dan melibatkan empat pelaku yang berasal dari satuan militer yang berbeda. Pada 1981 ZG masih berumur 16 tahun ketika PS256, kepala desa Mindelo (Turisca),

Manufahi) datang ke rumah ZG pada tengah malam dengan PS257, seorang prajurit ABRI. PS257 mengancam saudara laki-laki ZG untuk menyerahkan adiknya, “Kalau tidak, saya bunuh kamu.” ZG dipaksa berhubungan seks dengan PS257 yang kemudian berlangsung selama dua bulan. Setelah PS257 meninggalkan wilayah tersebut karena batalionnya dipindahkan, seorang anggota ABRI lain yang bernama PS258 tiba di daerah itu dan dengan seorang Hansip, pergi ke rumah ZG. Dengan mengancam, ia memaksa ZG berhubungan seks yang berlangsung selama empat bulan. Setelah PS258 pergi, ia disusul oleh seorang tentara lain, PS259, dan kemudian dengan seorang tentara lagi bernama PS260. Masing-masing dari mereka memaksa ZG untuk berhubungan seks selama masa tugas mereka di wilayah ini (satu sampai empat bulan). Pada 1984 seorang tentara yang tidak diketahui namanya berusaha memaksa berhubungan seks dengan ZG. ZG menjelaskan kepada Komisi:

Saya menyerahkan diri saya untuk dibunuh. Saya bilang kepadanya, “Kalau kamu mau bunuh saya, silakan saja, tapi saya tidak mau hidup dalam keadaan seperti ini lagi.” Maka hal itu pun tidak terjadi.¹⁵³

206. Akibat dari keadaan yang dialaminya, ZG menderita gangguan jiwa.¹⁵⁴

207. Pada awal dasawarsa 1980-an, militer Indonesia menganggap Lautém sebagai distrik yang menjadi basis Resistansi, yang olehnya disebut “Gerakan Pengacau Keamanan” (GPK). Sebab itu, operasi-operasi militer skala besar dilakukan di distrik ini, yang meningkatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Di Subdistrik Lospalos, penyiksaan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual terjadi di mana-mana. HG, yang namanya ada dalam daftar “perempuan yang bisa dipakai” di markas Kodim Lospalos (lihat paragraf 194 di atas), adalah satu di antara sejumlah perempuan yang menyampaikan kepada Komisi mengenai penangkapan dan kekerasan seksual yang dialaminya sesudahnya. Pada 1981, suami HG, seorang anggota pasukan pertahanan sipil yang dibentuk tentara Indonesia yang dikenal dengan nama Rakyat Terlatih (Ratih), ditembak mati ketika terjadi serangan oleh Falintil. Setahun kemudian pada 1982, HG ditangkap oleh ABRI karena dicurigai telah membantu pamannya yang berada di hutan.

Saya disuruh jalan dari rumah sampai pos Maluro [desa Lore 1], saya ditahan di sana selama tiga hari. Selama di pos, mereka menelanjangi saya dan mencabut rambut kemaluan saya, lalu mereka menyetrum kemaluan dan...telinga saya. Saya ditangkap bersama dengan semua gadis di Maluro. Kami semua ditelanjangi di depan penduduk Maluro, lalu mereka memasukkan baterai berukuran besar ke dalam alat kelamin kami.

208. HG mengalami interogasi, penyiksaan, dan pemerkosaan selama tiga hari. Sesudah itu ia diperbolehkan pulang tetapi tiap malam ia dipanggil bersama seorang ibu dan anak gadisnya, yang dipaksa “melayani” para tentara. Ia mengisahkan:

Masing-masing kami melayani satu orang sampai mereka pulang ke provinsi masing-masing. Saya melayani seorang tentara Indonesia yang bernama PS262. Setelah selesai saya tidak disuruh pulang tapi diharuskan tidur dengannya. Teman saya dan anaknya disuruh pulang lagi ke rumah. Pada suatu hari PS262 dipindahkan ke Kodim Lospalos. Saya juga diangkut ke sana untuk tinggal dengannya. Setelah saya mengandung, ia menyuruh saya pulang ke rumah saya di Maluro. Setelah melahirkan, ia tidak pernah peduli dengan anak saya sampai anak saya mati karena kelaparan...

Yang kedua bernama PS263 [orang Indonesia]. Ia menyuruh saya dan sekelompok orang lainnya pergi ke hutan untuk mencari anggota Falintil...Mereka menyuruh saya jalan duluan kurang lebih 100 meter baru mereka menyusul serta mengawasi dari belakang. Saya dipaksa memakai seragam loreng ABRI pada saat operasi ke hutan, tetapi saya tidak diberi senjata. Dalam perjalanan PS263 menyuruh saya "melayani"-nya jika ia menginginkan. Setelah saya hamil ia menyuruh temannya untuk menyuntik saya dengan maksud menggugurkan kandungan saya, namun saya menolak.

Saya sudah lupa nama "suami" saya yang keempat. Yang kelima bernama PS264 [orang Indonesia]. Akhirnya saya mempunyai lima orang anak dari ayah yang berbeda. Anak pertama yang sudah meninggal, ayahnya dari kesatuan Komando. Anak kedua ayahnya dari Batalion 412. Anak ketiga ayahnya dari Batalion 413. Anak keempat saya sudah lupa nama ayahnya dan kesatuannya. Anak yang terakhir ayahnya bernama PS264 saya tidak ingat dari kesatuan mana.¹⁵⁵

209. Sama seperti HG, AH juga menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan. Pada 1983, suaminya tertangkap dan ditahan selama beberapa tahun di Kodim Lospalos. Tak lama setelah itu, AH juga tertangkap oleh P265, seorang anggota kesatuan Nanggala dan oleh seorang anggota Kompi A Yonif 642. Ia dibawa ke pos ABRI di Maluro di mana ia disiksa dan diperkosa oleh sejumlah prajurit ABRI selama kira-kira seminggu. Setelah dibebaskan ia harus melakukan lapor diri setiap hari ke pos Maluro dari 1983 sampai 1987. Sering pada saat ia melapor, mereka memanggilnya masuk untuk diinterogasi dan diperkosa.¹⁵⁶

210. BH ditahan dan disiksa karena ia menolak untuk melayani keinginan seksual seorang prajurit. Selanjutnya ia menjadi korban perbudakan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh dua orang tentara Indonesia secara beruntun.¹⁵⁷ Komisi juga menerima kesaksian dari CH yang mengisahkan tentang penangkapan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual yang dialaminya di pos Maluro. Seperti HG, ia mengatakan bahwa namanya terdaftar dalam dokumen-dokumen ABRI dan bahwa ia bisa diteruskan dari satu kesatuan ke kesatuan selanjutnya pada saat pergantian pasukan masuk dan keluar Maluro.

Pada 1983, saya ditangkap oleh ABRI dari Batalion 372 karena [seorang anggota keluarga saya] masih berada di hutan. Selain itu, hasil kebun saya seperti singkong, ubi jalar, kacang-kacangan dan saya serahkan kepada Xanana dan Falintil yang mememanennya di kebun. Ada mata-mata ABRI yang melaporkan hal itu sehingga ABRI datang menangkap saya di rumah kemudian membawa saya ke pos ABRI di Maluro. Tiba di sana, saya ditelanjangi dan diinterogasi. Saya dipukuli dengan tangan dan kayu, diikat, ditendang, disundut dengan puntung rokok, dan mengalami penyiksaan lainnya. Pada saat interogasi anggota lain mencubit dan meremas-remas buah dada saya, tapi saya hanya pasrah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka memerkosa saya bergantian. Setiap kali mereka membutuhkan, saya harus “melayani” mereka; kalau tidak saya dipukul hingga babak belur. Selama dua tahun saya ditahan di sana [pos ABRI]. Tugas utama saya selama ditahan di sana adalah mencuci pakaian mereka, memasak, dan melayani kebutuhan seks mereka. Akhirnya, saya melahirkan seorang anak dari seorang anggota ABRI bernama PS266 [orang Indonesia].¹⁵⁸

E. Studi kasus: pemerkosaan dan perbudakan seksual di Mau Chiga, Ainaro

211. Untuk dapat memahami lebih baik konteks terjadinya perbudakan seksual, Komisi melakukan penyelidikan khusus mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Mau Chiga (Hato Builico, Ainaro) pada 1982-1987. Perbudakan seksual, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual terjadi pada waktu yang sama dengan penahanan, penyiksaan, pembunuhan massal, dan akhirnya, pengasingan ke Pulau Ataúro dan daerah-daerah terisolasi lainnya.

212. Pada 20 Agustus 1982 dini hari, tentara Falintil dan orang-orang dari Dare dan Mau Chiga menyerang Koramil Dare dan pos-pos ABRI di wilayah tersebut. Pertempuran sengit terjadi pada saat pasukan ABRI dan Hansip membalas tembakan dengan segera. Pada hari yang sama ABRI di daerah itu melancarkan serangan balasan terhadap penduduk sipil Dare dan Mau Chiga. Mereka saat itu juga diperkuat pasukan ABRI dari luar wilayah, termasuk Yonif 745 dan 746, yang dikirimkan ke wilayah tersebut dari wilayah sekitarnya. Pada 20-24 Agustus, ABRI memorak-porandakan Mau Chiga dan penduduknya melarikan diri dan tersebar ke segala arah, termasuk ke Gunung Kablaki. ABRI mengejar penduduk yang melarikan diri dan menangkap sebagian besar perempuan yang kemudian ditahan di sejumlah tempat: markas Kodim di Same dan Ainaro; Koramil di Maubisse (Ainaro), Lesuati (Same, Manufahi), dan Dare (Ainaro); gedung sekolah dasar Dare; pasar Dare; dan di tenda-tenda atau gubuk-gubuk darurat di Dare. Kecuali mereka yang ditempatkan dalam gedung sekolah, kebanyakan tahanan kemudian dipindahkan ke tempat-tempat penahanan yang lebih permanen di Pulau Ataúro, di Dotik (Manufahi), dan tempat-tempat di sekitar Dare (Ainaro).

213. Penduduk sipil yang tertangkap di Mau Chiga dibawa ke pos ABRI Lesuati (Same, Manufahi) setelah rumah mereka dibakar habis. Setelah berminggu-minggu di Lesuati, para tahanan ini, demikian pula mereka yang ditahan di Kodim di Same dan Ainaro, dibawa dengan truk Hino dipindahkan ke penjara Balide di Dili. Karena truk-truk tersebut sudah penuh, sebagian tahanan menunggu satu minggu atau lebih sampai truk-truk lain datang menjemput mereka. Jika truk-truk tersebut tidak datang, para tahanan yang tersisa di Lesuati berjalan selama beberapa jam sampai mereka tiba di Koramil Dare pada awal September 1982.

214. Ketika tempat-tempat penahanan sementara sekitar Dare sudah penuh, sejumlah tahanan diperbolehkan tinggal di rumah-rumah penduduk Dare. Para tahanan yang tinggal di rumah-rumah penduduk harus pergi melaporkan diri dan apel setiap hari di Koramil Dare. Sementara itu, para perempuan dalam tempat-tempat penahanan dijaga ketat dan diawasi. Mereka dipisahkan dari laki-laki dalam keluarga mereka dan diputuskan dari dukungan sosial dan emosional lingkungan mereka.

215. Kekerasan seksual terhadap perempuan Mau Chiga dilakukan tidak lama setelah mereka ditahan. Sebagai contoh, enam perempuan yang ditahan di Lesuati mengatakan bahwa mereka dibawa ke pos ABRI yang lain di Mantutu (tidak jauh dari Lesuati). DH, EH, dan FH disiksa secara seksual (lihat paragraf 310) sementara GH, HH, dan IH dibawa ke sana beberapa kali untuk diperkosa (lihat pula bagian mengenai Kekerasan Seksual dari Bab 7.8: Hak Anak).¹⁵⁹

216. JH tidak dibawa ke pos Mantutu, tapi diperkosa di pos Lesuati pada malam yang sama suami dan pamannya diinterogasi dan dibunuh di pos Mantutu.¹⁶⁰

217. Pemerkosan berkelompok terhadap tahanan perempuan sering terjadi dalam interogasi. Dari 66 perempuan yang diwawancarai (atau disebutkan dalam wawancara) seputar pemberontakan 1982 di Mau Chiga, 41 orang adalah korban kekerasan seksual: 24 orang diperkosa, 11 lainnya mengalami penganiayaan seksual menyerupai perbudakan, dan enam lainnya mengalami bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. GH bersaksi kepada Komisi:

Pada 20 Agustus 1982, dua orang [prajurit] ABRI membakar semua rumah di Mau Chiga dan memerintahkan saya untuk pergi ke Lesuati. Saya di sana selama satu minggu bersama keluarga saya. Suatu malam mereka membawa saya ke pos militer di Mantutu untuk diinterogasi. Ternyata mereka berbohong karena di sana saya diperkosa oleh PS61, orang Timor-Leste tentara Batalion 745 berpangkat Serka [Sersan Kepala]. Mereka memerkosanya di jalan di alang-alang. Ia tidak sendirian. Anggota-anggota ABRI dan Hansip juga berbuat sama. Waktu itu badan saya seperti badan pelacur.¹⁶¹

E.1. Penahanan di Dare, Ainaro

218. Kantor Koramil Dare merupakan pusat geografis dan logistik di mana kejahatan terhadap penduduk Mau Chiga diorganisasi dan dilaksanakan. Secara geografis, kantor Koramil Dare terletak di antara dua tempat penahanan. Sebuah sekolah dasar terletak tepat di belakang Koramil dan pasar terletak tepat di seberang Koramil. Kebanyakan orang yang tertangkap akhirnya dibawa ke Koramil ini sebelum tujuan akhirnya ditentukan.

219. Bagi kebanyakan tahanan perempuan, interogasi hanya digunakan sebagai dalih oleh para anggota pasukan keamanan untuk memerkosa mereka. “Setiap malam mereka [militer] mengambil perempuan...dan mengatakan bahwa mereka ‘mencari informasi’, tapi kenyataannya mereka memerkosa perempuan-perempuan itu.” Biasanya, pertanyaan pembuka kepada perempuan yang telah menikah yang sedang diinterogasi adalah, “Suamimu melarikan diri ke mana?”¹⁶² Pemeriksaan yang dilakukan pada saat interogasi biasanya disertai bentuk-bentuk penyiksaan fisik lain. LH mengungkapkannya kepada Komisi:

Kami bertiga [saya, LH1, dan LH2] pergi mencari makanan di Hatuquero. Di sana, kami ditangkap oleh kepala kampung Hauteo yang bernama PS267. Ia membawa kami bertiga ke Aituto [Maubisse, Ainaro] dan menyerahkan kami ke Koramil Dare...[Di sana] seorang Hansip bernama PS54 mengatakan kepada kami bertiga, “Mengapa kalian tidak ikut [saya] supaya saya bisa jadikan kalian bertiga istri?” Setelah berkata begitu ia...mulai memukuli saya dengan batang bambu yang besar. Kemudian ia mengeluarkan korek api dari saku celananya dan membakar mulut, telinga, tangan, dan badan saya sampai kulit saya menjadi hitam dan bengkak. Setelah selesai membakar saya, ia menyuruh saya membuka seluruh baju yang saya pakai hingga tak sehelai benang pun menutupi tubuh saya. Kemudian ia pergi memanggil [anggota] ABRI dan mereka berdua memerkosa saya bergiliran.¹⁶³

220. Beberapa perempuan dipanggil untuk diinterogasi di kantor Koramil sementara yang lainnya ditahan di sana. LH1, bersama dengan LH, MH, dan NH ditahan di dapur Koramil Dare selama satu minggu sebelum dipindahkan ke sebuah rumah di Dare. LH1 adalah satu-satunya yang tidak diperkosa selama berada di dapur Koramil.¹⁶⁴

221. Fasilitas ABRI di Dare bukanlah satu-satunya tempat anggota-anggota tentara memerkosa perempuan-perempuan Mau Chiga. OH dan PH, dua perempuan yang memasak untuk suatu pertemuan bawahtanah untuk mempersiapkan serangan Falintil ke Koramil Dare, diperkosa pada saat penahanan mereka di Kodim Ainaro.¹⁶⁵ Salah satu pelakunya adalah Sersan Mayor PS269. Ia memerkosa OH “dengan sesuka hati” setelah ia diinterogasi dan dipukuli punggungnya sampai ia tidak dapat berjalan. Ketika itu, OH sedang mengandung dua bulan. OH1, bersama seorang laki-laki lain dari Mau Chiga dimasukkan ke dalam penjara Kodim Ainaro beberapa hari sebelum OH dan PH ditahan di sana, menyebutkan para pelaku lainnya. OH1 mengatakan kepada Komisi:

Tanggal 11 Juni 1982, saya masih berada di sel ketika seorang ABRI membawa saya keluar untuk interogasi karena informasi yang saya berikan menurut mereka tidak benar. Mereka pukul, tendang, cubit, bakar dan setrum seujur tubuh saya. Pada 12 Juni 1982, mereka menangkap PH dan OH dan memasukkan mereka berdua dalam sebuah sel. Kemudian mereka berdua diperkosa.

Suatu hari, hal yang sama juga terjadi pada seorang perempuan yang saya tidak tahu namanya (ia berasal dari Ainaro). Ia juga diperkosa ABRI dan Hansip. Kami tahu sebab ia berada di sel sebelah kami dan kami dengar semuanya lewat dinding. Kami dengar ia teriak kira-kira begini, “Saya hamil sudah lima bulan. Kenapa harus memerkosa saya begini?” Yang berkuasa saat itu adalah PS270 dan PS271 [orang Indonesia]. PS271 itu seorang intel yang jarang memakai seragam. Salah satu pelaku yang memerkosa PH dan OH adalah PS272 [Kasi I, Sersan Satu]. Yang lain PS406, seorang intel yang juga jarang memakai seragam.¹⁶⁶

222. QH juga ditahan di Kodim Ainaro selama satu tahun sebelum ia dibebaskan dari selnya untuk memasuki situasi perbudakan seksual dalam rumah tangga, setelah terjadinya perundingan antartentara di Kodim tersebut.¹⁶⁷

223. RH ditempatkan di dalam sebuah sel gelap ketika ia ditahan di sebuah pos ABRI:

Saya berada di Nunumogue [Hato Builico, Ainaro] selama tiga bulan, selalu dalam pengawasan ABRI. Tiba-tiba seorang Hansip datang ke rumah dan mengatakan bahwa saya dan tiga teman...dipanggil oleh Kasi I Pak PS271, PS270, dan PS273 [orang Indonesia]. Setelah sampai di sana, mereka menginterogasi kami mengenai penyerangan di Mau Chiga oleh Falintil. Karena saya tidak mengatakan hal yang sebenarnya, mereka memasukkan saya dalam sebuah sel rahasia yang pintu dan jendelanya tidak bisa dibuka. Setelah selama beberapa minggu di dalam sel gelap itu, suatu malam ketika saya sedang tidur, tiba-tiba ABRI yang menjaga pintu sel masuk ke dalam sel dan melakukan hal buruk pada saya [memerkosa saya]. Setelah selesai, ia mengancam, “Jangan ceritakan hal itu pada siapapun.” Selama tiga bulan saya di dalam sel gelap itu.¹⁶⁸

224. Puluhan orang dari Mau Chiga ditahan di pasar Dare di seberang Koramil Dare. Pasar tersebut adalah semacam pendopo besar dengan atap daun. Beberapa dari mereka yang tertangkap dan ditahan di pasar hanya semalam tinggal di sana sebelum mereka dipindahkan ke sekolah dasar di seberang jalan. Sementara mereka yang berasal dari Mau Chiga tinggal di pasar selama beberapa bulan sambil membangun tempat tinggal sementara di dekatnya. Anggota ABRI dan Hansip setidaknya memerkosa lima perempuan pada saat mereka ditahan di sana. Mereka dibawa pada malam hari dan diperkosa di belakang pasar. Dua dari kelima perempuan tersebut sedang hamil tua ketika mereka diperkosa. SH menyampaikan kepada Komisi:

Pada malam hari tanggal 17 September 1982, beberapa anggota Hansip datang ke tempat kami. Mereka mengatakan bahwa saya dipanggil oleh komandan untuk diinterogasi. Setelah sampai di luar Koramil, ternyata mereka langsung memerkosa saya. Mereka itu adalah PS274, PS275, PS276, dan PS277. Ketika saya sedang diperkosa, PS277 memegang senter untuk menerangi posisi kami. Waktu itu saya sedang hamil lima bulan.¹⁶⁹

225. TH diperkosa pada malam sebelum ia melahirkan. Ia mengungkapkan kepada Komisi:

...kira-kira pada tengah malam, empat orang Hansip datang ke tempat tinggal kami. Mereka bertanya kepada saya, "Mana suami kamu Tomás?" "Suami saya lari ke mana saya tidak tahu." "Kamu bohong!" Lalu mereka membawa saya keluar...setelah di luar... saya bergantian diperkosa oleh keempat Hansip itu. Pada saat satu orang memerkosa saya, ada satu orang lagi memegang senter ke arah saya dan orang yang memerkosa saya. Begitu terus sampai mereka selesai. Saya merasa sangat lapar dan sangat lemah karena mereka memerkosa saya sampai pagi tanpa henti. Setelah semua selesai saya menangis, tapi apa kata mereka? "Kenapa kamu menangis? Kelamin kami kan sama dengan kelamin suami kamu. Kami lakukan ini supaya anak kamu bisa cepat keluar." Selesai berkata itu, mereka meninggalkan saya. Saya berusaha berdiri dengan berpegangan pada pohon-pohon di dekat saya dan berjalan kembali ke tempat tinggal kami. Perut saya terasa sakit sekali. Setelah lebih daripada dua jam saya mengalami perdarahan yang cukup banyak. Saya sadar bahwa saya akan melahirkan. Saya pergi bertanya pada orang yang tinggal dekat pos Koramil jika saya bisa pinjam dapurnya untuk melahirkan anak saya. Pada akhirnya mereka memberi sebuah tempat untuk saya. Kemudian saya melahirkan anak saya di dapur itu pada 18 September, pukul 10 pagi.¹⁷⁰

226. Berbagai kesaksian dari mereka yang mengalami kekerasan menunjukkan adanya upaya untuk memisahkan para tahanan laki-laki dan perempuan. Albertina Martins mengatakan kepada Komisi bahwa orang-orang yang sedang menghadiri satu acara tradisional *koremotan*^{*} di Maubisse ketika serangan terjadi dibawa ke Dare. Di sana, laki-laki dan perempuan ditempatkan terpisah. Perempuan dibawa ke pasar sementara "semua laki-laki dari kelompok itu dibawa ke Ataúro."¹⁷¹

227. Pada akhir Agustus 1982, sekolah dasar yang terletak di belakang kantor Koramil Dare diambil alih oleh ABRI selama kira-kira enam bulan untuk digunakan sebagai

.....
* *Koremotan* berarti "melepas hitam." Ini adalah upacara tradisional yang dilaksanakan 12 bulan setelah kematian seseorang, ketika para anggota keluarga bisa melepaskan pakaian hitam simbol berduka. Biasanya acara ini disertai dengan lagu-lagu dan dansa.

tempat penahanan sementara. Banyak tahanan yang disiksa dan diperkosa di sekolah tersebut. Penduduk Mau Chiga dibawa ke gedung itu dalam kelompok-kelompok ketika mereka mulai ditangkap sejak 22 Agustus 1982. Beberapa orang tinggal di sana selama beberapa hari atau beberapa minggu, yang lainnya selama beberapa bulan. Jika ada orang yang dipindahkan keluar, akan selalu ada yang dibawa masuk. Sejak awal hingga akhir September jumlah orang yang dikirim ke sekolah tersebut untuk ditahan menurun sehingga pada Oktober hampir tidak ada lagi orang yang dimasukkan ke sekolah itu. Antara Maret dan April 1983 semua yang pernah ditahan di sana sudah dipindahkan dan sekolah tersebut kembali pada fungsi awalnya.

228. Pada 1982 sekolah dasar tersebut terdiri atas empat ruang besar. Di setiap ruangnya terdapat pintu kayu dan jendela-jendela besar yang tertutup kawat kandang ayam. Tiga ruangan digunakan untuk menyekap para tahanan. Orang-orang yang ditahan dalam satu ruangan tidak diizinkan melihat atau bercampur dengan tahanan yang disekap di ruangan lain. Para tahanan harus tidur di atas lantai tak beralas dan setiap hari dilepaskan hanya sebentar untuk mencari makan sendiri. ABRI menggunakan satu dari empat ruangan tersebut yang terletak di ujung gedung sekolah tersebut sebagai kantor dan ruang interogasi. Prajurit-prajurit ABRI sering memanggil perempuan ke “kantor” untuk “interogasi”. Di ruangan tersebut ada meja-meja, buku-buku, dan fasilitas kantor yang lain dan juga sebuah kasur dan sebuah bantal yang digunakan ketika perempuan diperkosa.

229. Data yang dikumpulkan oleh Komisi menunjukkan bahwa ada suatu pola pemerkosaan yang mengikuti hierarki kepangkatan para pelaku. Perwira berpangkat tinggi menggunakan “kantor” ABRI di sekolah untuk memerkosa. Hansip dan tentara berpangkat rendah cenderung mendatangi gedung sekolah pada tengah malam untuk menyeret perempuan ke luar dan memerkosa mereka di alang-alang sekitar sekolah. PS278 bertugas sebagai TBO untuk PS279, seorang anggota Yon Zipur (Batalion Zeni Tempur) 5. PS278 memberikan kesaksian tentang salah satu tugasnya:

Salah satu tugas tambahan saya adalah kalau mereka perlu perempuan, mereka suruh saya pergi ke sekolah dan kasih tahu orangtua perempuan yang mereka mau pakai. Orangtua harus suruh dia mandi dan tunggu di kamar kosong di dalam sekolah. Pintu dibuka begitu saja. Ada tikar dan bantal di atas lantai. Kalau kamar dipakai baru mereka kunci dari dalam. Saya dapat tugas seperti itu. Saya harus ke sekolah sekitar dua kali seminggu. Yang suruh saya buat itu hanya PS279. Saya tidak tahu kalau yang lain pergi pada malam itu atau tidak. Saya pergi pada sore hari dan langsung kembali ke pos. Terus PS279 pergi dan kemudian kembali lagi; dia tidak menginap di sana. Komandan mungkin tahu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa sebab kuasa sudah diambil oleh PS279 yang sangat jahat. Satu kali mereka bawa seorang perempuan ke pos pada malam hari. Saya hanya dengar ia berteriak, tapi pada pagi harinya saya tidak melihat dia.¹⁷²

230. UH baru berusia 15 tahun ketika ia diperkosa berkali-kali oleh anggota ABRI dari kesatuan Yon Zipur dan Hansip.

Saat itu saya berumur 15 tahun dan masih muda. Setelah tiba di sana [Dare], semua perempuan, anak-anak dan orang tua ditampung di sekolah itu. Selama saya tinggal di sana tiap malam mereka selalu mengganggu saya. Anggota ABRI dan Hansip, PS280 dan PS281, membawa saya ke ruangan seorang tentara Indonesia bernama PS279. Ruangan itu adalah sebuah ruangan kantor sekaligus kamar tidur. Saat itu dia membawa pistol dan berpakaian lengkap ABRI ketika “menyerang” saya...Pada malam kedua seorang Hansip dari Hato Builico [Ainaro] melakukan hal yang sama terhadap saya. Ia melakukannya di luar, dengan posisi berdiri. Pada malam ketiga, hal yang sama dilakukan terhadap saya di ruangan PS279. Pada malam keempat seorang tentara ABRI, PS229 [Indonesia], membawa saya ke rumah temannya yang bernama PS283. Saat itu temannya sedang tidak ada di rumah dan PS229 melakukan hal keji itu pada saya.¹⁷³

231. Meskipun ruang interogasi di sekolah tersebut berfungsi sebagai tempat untuk memerkosakan perempuan, kebanyakan pemerkosaan terjadi di luar ruangan, seperti yang dikisahkan dalam dua kesaksian berikut ini. VH menceritakan kepada Komisi:

Setelah disekap di sekolah selama satu bulan beberapa Hansip—PS284 dari Tatiru Dare, komandan peleton PS54, PS286, dan PS287—memanggil saya, katanya untuk diinterogasi, ternyata setelah berada di luar sekolah mereka membawa saya ke dalam hutan lalu saya diperkosa.¹⁷⁴

232. WH, yang suaminya telah melarikan diri ke hutan, mengungkapkan:

Setelah sampai di sekolah itu para anggota Hansip dan ABRI mulai “menunjukkan ekornya.” Kalau anak gadis tidak ada maka orang tua yang jadi korban mereka. Seorang Hansip bernama PS288 yang berasal dari Dare Mulo yang selama ini saya kenal, melakukan hal seburuk itu terhadap saya. Awalnya dia pura-pura menanyakan tentang keberadaan suami saya, tetapi pada akhirnya dia melampiaskan emosinya pada saya di luar sekolah di tengah alang-alang.¹⁷⁵

233. Hampir sepertiga dari seluruh perempuan yang ditahan di sekolah dasar Dare, yang berusia 15 tahun ke atas, diperkosa ketika ditahan di sana.

Tabel 2: Tahanan Perempuan di Gedung Sekolah Dasar, Dare, Ainaro, 1982-1983

| No. | Tanggal ditahan (1982) | Nama | Usia (perkiraan) | Anak-anak yang mengikuti | Kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi ketika ditahan di sekolah |
|-----|------------------------|-----------------------|------------------|---|---|
| 1 | 23 Agustus | XH | 22 | | pemeriksaan (kemudian: perbudakan seksual) |
| 2 | 25/26 Agustus | VH | 25 | satu anak berusia di bawah lima tahun, satu bayi menyusui | pemeriksaan |
| 3 | " | Orlanda da Costa | 18-20 | satu bayi menyusui | |
| 4 | " | YH | 15 | | pemeriksaan |
| 5 | " | ZH | 15 | | pemeriksaan |
| 6 | " | UH | 15 | | pemeriksaan |
| 7 | " | AI | 38 | satu anak berusia di bawah lima tahun, satu bayi menyusui | upaya pemeriksaan |
| 8 | " | Mariana da Costa | 40 | delapan orang anak | |
| 9 | " | BI | 22 | | (kemudian: perbudakan seksual) |
| 10 | akhir Agustus | Eduarda da Costa | 33 | tiga anak, satu bayi menyusui | |
| 11 | " | Celestina da Silva | 30 | satu anak | |
| 12 | " | FH | 33 | enam anak, satu bayi menyusui | (sebelumnya: penyiksaan seksual) |
| 13 | " | DH | 36 | dua anak | (sebelumnya: penyiksaan seksual) |
| 14 | " | EH | 26 | satu bayi menyusui | (sebelumnya: penyiksaan seksual) |
| 15 | " | Laurentina de Orleans | 44 | lima anak, satu bayi menyusui | |
| 16 | awal September | WH | 35 | satu anak | pemeriksaan |

| | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 17 | Pertengahan September | CI | 40 | tiga anak | pemeriksaan |
| 18 | " | Joana Britos | Tidak diketahui | lima anak, satu bayi menyusui | |
| 19 | " | DI | 20 | dua anak | pemeriksaan |
| 20 | " | EI | 25 | | upaya pemeriksaan |
| 21 | " | Elisa Barbosa | 50 | | |
| 22 | 30 Sept/1 Oktober | Armanda Barbosa | 45 | dua anak | |
| 23 | Tidak diketahui | FI | Remaja | | pemeriksaan |
| 24 | Tidak diketahui | IH | 14 | | |
| 25 | Tidak diketahui | Silvina Barbosa | Tidak diketahui | | |
| 26 | Tidak diketahui | Juliana B | 40 | | |
| 27 | Tidak diketahui | Josefa da Conceição | 30+ | | |
| 28 | Tidak diketahui | Bendita Barbosa | 22 | | |
| 29 | Tidak diketahui | TH | 25 | | pemeriksaan |

234. Sekitar pertengahan September, karena pasar dan sekolah dasar sudah penuh dengan tahanan, ABRI harus mencari tempat lain. Sejumlah tahanan diizinkan tinggal dengan keluarga atau kenalan yang tinggal di dekat Koramil di Dare. Akan tetapi, tinggal di rumah, dan bukannya di sekolah atau pasar, tidaklah menjamin keamanan tahanan perempuan. BI memberikan kesaksiannya kepada Komisi:

Setiap malam para ABRI sering menjemput saya di rumah untuk menghadiri acara dan menemani mereka berdansa [di sekitar Dare]. Justru pada kesempatan itu mereka gunakan untuk melayani nafsu mereka. Sampai akhirnya saya mendapatkan seorang anak dari seorang ABRI Nanggala 16 yang bernama PS289.¹⁷⁶

235. Militer menentukan tempat-tempat di mana para tahanan boleh membangun rumah. Dua tempat yang disebutkan adalah Lebukua, sedikit lebih ke atas dari sekolah tersebut ke arah Gunung Blehetu, dan Fatuk Hun, sebuah permukiman kecil di Dare. Pada saat semua sudut Dare telah dipenuhi oleh para tahanan dari Mau Chiga, komandan Koramil meminta bantuan kepala desa Nunumogue untuk dapat memindahkan sejumlah tahanan ke Nunumogue. Situasi di Nunumogue tidak jauh berbeda dengan di Dare. Tidak ada fasilitas untuk pengungsi sehingga para tahanan dari Mau Chiga harus membangun pondok-pondok yang sangat sederhana dengan bahan-bahan yang didapat dari hutan. Seperti di Dare, para pengungsi perempuan di Nunumogue juga rentan terhadap kekerasan seksual. Pada suatu hari, ketika GH* pergi ke luar rumah untuk mengambil air, ia diikuti oleh seorang Hansip yang kemudian memerkosanya.¹⁷⁷

236. Pemerkosaan tidak hanya dilakukan terhadap perempuan dari Mau Chiga, namun juga terhadap perempuan dari desa-desa di sekitarnya. GI dari Desa Mulo (Hato Bulico) menceritakan mengenai penculikannya pada saat Yonif 745 melakukan penyerangan terhadap Hautio pada 1982. Dengan dalih bahwa Kasi I Intel Kodim Ainaro memanggilnya, GI dibawa ke sebuah pos komando tempat ia diperkosa berulang-kali oleh tiga anggota Yonif 745. Sebelum itu, GI juga disiksa dan diperkosa oleh Kasi I Intel PS229, dan dua anggota Kodim 1633, PS291 dan PS292 [orang Indonesia].¹⁷⁸

237. Pemerkosaan dan perbudakan seksual berlanjut di Dare jauh sesudah serangan balasan pertama dan penangkapan besar-besaran pada Agustus dan September 1982. HI tertangkap pada 1984 karena pamannya seorang anggota Falintil. Di Koramil Dare sepuluh anggota Nanggala memukulinya dan kemudian membawanya ke Kodim di Ainaro tempat ia ditelanjangi dan disetrum selama dua jam hingga ia pingsan. Setelah itu ia terpaksa menjalani perbudakan seksual oleh Kasi I Intel PS229 dari Koramil Ainaro yang berlangsung selama tiga bulan.¹⁷⁹

E. 2 Penahanan di Pulau Ataúro, Dili

238. Setelah pemberontakan yang gagal, para tahanan dari Mau Chiga dikirim ke Pulau Ataúro setidaknya dalam tiga gelombang. Pada 30 Agustus 1982, kelompok pertama dari Mau Chiga—termasuk para laki-laki yang tertangkap sebelum terjadi serangan oleh Falintil terhadap Koramil Dare, sebagian ditahan di Kodim Ainaro, dan sebagian lagi di Koramil Lesuati—dikirim ke Pulau Ataúro. Kelompok kedua berangkat ke Ataúro pada 16 Oktober 1982 dan yang ketiga berangkat pada 6 Januari 1983. Suatu submisi diterima oleh Komisi dari komunitas Mau Chiga berupa daftar nama orang-orang yang meninggal atau ditahan. Daftar ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang ditahan di Ataúro adalah 431 orang, yang terdiri atas 202 laki-laki dan 229 perempuan.¹⁸⁰ Keadaan kehidupan di Ataúro sangat buruk, dengan kedatangan lebih daripada 3.000 tahanan dari seluruh bagian di Timor-Leste. Dari kawasan Mau Chiga, sedikitnya 56 orang—laki-laki,

* GH adalah perempuan yang sama yang kesaksiannya tentang pemerkosaan di pos Mantutu tidak lama setelah penghancuran Mau Chiga dikemukakan pada bagian awal bab ini (paragraf 215).

perempuan, dan anak-anak—meninggal karena penyakit, kekurangan air, dan kekurangan gizi selama penahanan mereka di Ataúro. Komisi tidak menemukan bukti adanya kekerasan seksual selama masa ini (lihat Bagian 3: Sejarah konflik; Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan).

239. Pada 27 November 1984, setelah dua tahun berada di Ataúro, sekitar 300 orang yang berasal dari Mau Chiga dan desa-desa di sekitarnya dikirim kembali ke Distrik Ainaro.¹⁸¹ Mereka dipindahkan ke Bonuk (Hato-Udo, Ainaro) suatu wilayah yang tidak berpenduduk di pantai selatan Distrik Ainaro. Beberapa sumber menyampaikan bahwa kehidupan di Bonuk mirip dengan beberapa bulan pertama di Ataúro: "...[kami] lebih menderita dibandingkan ketika hidup di Ataúro, karena Bonuk sangat terpencil, kering, dan banyak nyamuk."¹⁸² Satu-satunya bahan makanan yang mereka punya adalah jagung yang mereka bawa dari Ataúro. Setelah sekitar 50 hari di Bonuk, dan setelah kunjungan oleh Gubernur Mário Viegas Carrascalão, para tahanan di Bonuk dikembalikan ke Dare. Di sana mereka sekali lagi berada dekat dengan Koramil Dare, yang merupakan pusat setempat untuk mengontrol penduduk Mau Chiga. Dalam perjalanan dari Bonuk ke Dare, sekitar 20 sampai 30 orang laki-laki dan perempuan yang dianggap menjadi pemimpin Resistansi ditahan di Mau-ulo III, satu desa yang terletak sekitar satu kilometer dari Ainaro.^{*} Mereka diperintahkan membangun rumah-rumah dan tinggal di sana. Tidak ada pelanggaran seksual yang dilaporkan terjadi di Ataúro atau Bonuk (lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan).

240. Mayoritas masyarakat Mau Chiga akhirnya kembali ke Dare. Dibandingkan dengan tahun-tahun ketika di Ataúro, keadaan di Dare lebih buruk, terutama karena pengawasan militer di dan sekitar Dare lebih ketat. Mereka yang berasal dari Bonuk harus melapor ke Koramil sebelum diizinkan kembali ke rumah masing-masing. JL pindah ke rumah tradisional keluarganya di Dare dan tetap tinggal di sana selama lebih daripada tiga tahun. JL mengungkapkan kepada Komisi:

Pada malam pertama kami tinggal di sana, kami didatangi oleh seorang ABRI, PS294, Kepala Seksi III,[†] berasal dari Jawa Timur, bersama seorang TBO. Mereka datang dan memanggil saya keluar, tetapi saya menolak. Pada malam kedua [anggota ABRI itu] datang sendiri dengan berseragam lengkap dan membawa pistol, sama seperti malam pertama, dan dia mengancam mau membunuh semua keluarga saya. Terpaksa mama saya bilang, "Lebih baik kamu terima sudah." Jadi, PS294 mengunjungi rumah kami [setiap hari] selama seminggu dan memerkosa saya, baru ia dipindahkan ke Ainaro. Dari hubungan

* Terletak di jalan antara Ainaro dan Suai, Mau-ulo III tidak jauh letaknya dari tempat pembantaian yang terkenal di Builico, yang dikenal luas sebagai Jakarta II (lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan). Penduduk yang ditempatkan di Mau-ulo III tahu mengenai Jakarta II dan hal ini mungkin memperberat tekanan yang mereka alami ketika tinggal di sana. Di jalan dari arah Suai, tepat sebelum Mau-ulo III, juga ada satu pos tentara tempat peralatan perang disimpan. Satu peleton yang terdiri atas 30 hingga 40 prajurit bertugas di pos tersebut.

† Kasi atau Kepala Seksi III adalah Kepala Seksi Teritorial; Kasi I adalah Kepala Seksi Intelijen.

*sama PS294 saya menjadi hamil. Saya baru melahirkan, ada seorang ABRI [orang Indonesia], PS229, yang memberi saya satu kaleng jagung untuk dimakan supaya saya bisa menyusui anak... Waktu [anak saya] baru berumur lima bulan, Sersan Satu PS391 [orang Indonesia], yang mau berhubungan sama saya, tetapi saya tidak mau. Dari saat itu, saya tidak lagi diganggu oleh tentara yang mau memerkosa saya.*¹⁸³

E.3 Penahanan di Dotik (Alas, Manufahi)

241. Pada umumnya, penduduk Mau Chiga yang tertangkap di gua-gua dan hutan di Gunung Kablaki yang terletak di atas Same ditahan di Kodim atau Koramil Same. Pada 7 Januari 1983, sekitar 100 orang penduduk dari daerah Mau Chiga, lebih daripada 70% dari mereka adalah laki-laki, dikirim dari Same ke Dotik, satu desa di sebelah selatan Alas di pantai selatan Distrik Manufahi. Ketika mereka tiba, mereka menjumpai satu pos ABRI dan sejumlah keluarga telah mendiami tempat itu. Namun, tidak ada rumah atau tanah untuk bercocok tanam yang dipersiapkan untuk mereka, dan ABRI tidak memberi tahu mereka di mana harus tinggal. Kepala desa Dotik, Eusebio, menyediakan sebidang tanah yang belum digarap yang terletak agak jauh dari pos ABRI dan keluarga-keluarga lain. Mereka tinggal di bawah tenda terpal yang disediakan ABRI pada waktu masih membangun rumah dari bahan-bahan yang ada di hutan. Seperti Bonuk, Dotik berhawa panas, langka air, dan banyak nyamuk. Empat pos “Sistem Keamanan Lingkungan” (Siskamling) dibangun di sekeliling rumah-rumah, satu di masing-masing penjuru—utara, selatan, timur, dan barat. Pos-pos itu dijaga oleh sejumlah anggota Yonif 745.

242. Setidaknya tiga perempuan diperkosa di Dotik. Pada 1982 KI, ayahnya, dan saudara perempuannya, tinggal dalam sebuah rumah bersama dua perempuan dari Mau Chiga, L dan M, dan anak M (berumur sekitar enam tahun). KI memberikan kesaksian kepada Komisi:

Kami di Dotik sudah satu bulan baru ABRI masuk dan mulai mengganggu kami. Suatu malam M dipanggil dan diperkosa karena suaminya adalah komandan Falintil, sekarang ia sudah meninggal. Tetapi bukan hanya M; kami bertiga juga diperkosa. Mereka datang dari posnya ke Dotik setiap satu sampai dua minggu dan kapan saja mereka mau berhubungan dengan perempuan, mereka datang. Kadang-kadang mereka datang satu-satu, kadang-kadang mereka semua memerkosa kami secara bergiliran sampai mereka puas. Kali pertama mereka datang ke rumah mereka menembak di dalam rumah. Waktu itu bapak saya bilang, “Sekarang nasib kita di tangan mereka. Sebaiknya kalian [tiga anak perempuan] serahkan diri ke mereka.” Kemudian mereka mulai datang secara teratur.

Waktu itu juga ada Babinsa orang Indonesia yang bernama PS295. Ia terus datang mengganggu kami semua, tapi akhirnya ia mengambil L menjadi “istri”. Ia menyuruh masyarakat untuk membangun rumah

buat dia dan L setelah mereka di Dotik dua bulan. Setelah tinggal di sana selama satu setengah tahun, L melahirkan seorang anak. Setelah anak ini berumur satu tahun mereka pindah ke Dare. L tetap di rumah itu setelah PS295 pulang ke Indonesia. Saya dan M diperkosa PS295 pada minggu-minggu awal, tapi setelah L pindah dari rumah kami dan tinggal bersama PS295 kami tidak diganggu lagi olehnya.

Suatu hari seorang Babinsa yang bernama PS296 dari Bobonaro masuk rumah dan mengancam saya. Saya pernah diperkosa tiga orang—PS 296 [orang Timor-Leste] dan dua orang tentara Indonesia. Pada saat salah satu memerkosa saya, yang lain menjaga. Salah satu dari tentara Indonesia itu pernah mengancam saya dengan senjata api di leher saya. Saya diperkosa sampai [akhirnya] saya mempunyai anak. Saya tinggal di Dotik selama tiga tahun.¹⁸⁴

243. Pada 1984, Gubernur Mário Viegas Carrascalão mengunjungi masyarakat yang ditempatkan di Dotik, seperti kunjungan yang dilakukan sebelumnya ke warga Mau Chiga yang ditahan di Bonuk. Segera setelah kunjungan tersebut, para tahanan di Dotik dikembalikan ke Dare. Sekitar 1985, penduduk dari Mau Chiga yang ditahan di Atauro, Bonuk, Mau-ulo, dan Dotik kembali ke Dare. Sekali lagi, mereka harus memenuhi sendiri kebutuhan makanan dan tempat tinggal. Baru kemudian pada sekitar 1987 penduduk Mau Chiga diperbolehkan kembali ke desa mereka sendiri.

Kesaksian XH, Mau Chiga, Hato Bulico, Ainaro

Kisah XH dimulai dengan penyerangan Falintil terhadap Koramil Dare dan Ainaro dan operasi pembalasan ABRI pada 20 Agustus 1982. XH membantu mengobati seorang Falintil terluka yang ditemui dekat rumahnya:

Mungkin sebab saya ikut menolong dia, saya sendiri dicurigai sehingga pada sore hari itu saya ditangkap oleh TNI dan Hansip di rumah saya di Mau Chiga dan dibawa ke Dare. Pada saat itu hanya perempuan yang ditahan di pos Koramil Dare. Di situlah ABRI dan Hansip mulai menyiksa kami satu per satu. Sebelum saya diperkosa, saya dipukul dengan senjata api di bagian rusuk kiri sampai cedera, ditendang dengan sepatu tentara di bagian belakang punggung sampai saya tidak bisa jalan...[Kemudian] mereka memerkosa saya. Setelah diperkosa, saya dibakar dengan puntung rokok di bagian muka dan di tangan sampai luka hitam. Semua perbuatan itu mereka lakukan terhadap saya selama satu bulan di pos Koramil Dare.

Saya juga diperlakukan sebagai budak. Setiap hari saya disuruh cuci pakaian, masak, dan lain-lain. Mereka juga memaksa saya

pakai seragam ABRI. Saya diberi ransel, radio, pistol, dan amunisi. Mereka mengajari saya sehingga saya bisa menggunakan alat-alat tersebut supaya saya bisa ikut beroperasi bersama mereka ketika mereka pergi ke Gunung Kablaki untuk mencari komandan Falintil. Kadang-kadang ransel terlalu berat sampai saya jatuh. Satu kali saya jatuh di tengah kali sampai pakaian seragam basah semua. Tetapi kalau saya jatuh, ABRI tidak menghiraukan dan menyuruh saya untuk berjalan terus. Setibanya kami [di tempat tujuan] saya diserahkan kepada pasukan yang bertugas di sana untuk diperkosa. Setelah itu kami pulang ke pos Koramil Dare dengan alasan bahwa para komandan Falintil tidak ditemukan. Pada hari berikutnya saya tidak mau ikut beroperasi lagi.

Waktu itu ABRI...menggunakan sekolah di belakang kantor mereka...Tetapi itu bukan lagi sekolah sebenarnya, tapi tempat di mana perempuan disuruh tinggal bersama dengan ABRI. Itulah tempat saya tinggal. Setiap hari saya dipanggil untuk diinterogasi, tapi sebelum interogasi mereka sudah diberi informasi palsu tentang saya dari komandan Hansip, seorang Timor-Leste yang tinggal di Hato Builico. Kalau saya bicara tidak sesuai dengan informasi palsu yang diberikan oleh Hansip itu, maka saya akan mulai disiksa dan diperkosa. Bukan saya sendiri yang diperkosa, tapi ada ibu-ibu yang masih menyusui, ada yang anaknya baru berumur dua bulan, ada yang anaknya berumur tiga atau empat tahun. Kalau ABRI memerkosa ibu-ibu itu, mereka dibawa keluar dipisahkan dari anak-anaknya. Walaupun anaknya menangis, ABRI tidak hiraukan karena mereka mau memuaskan nafsu mereka. Mereka juga memerkosa ibu-ibu yang hamil.

Tomás adalah suami dari seorang ibu yang saya ceritakan di atas. Kedua tangannya diikat ke belakang, kemudian diikat lagi di belakang mobil Hino, dan ditarik keliling wilayah Dare. Sambil mobil tarik, ia dipukul oleh ABRI dan Hansip dengan kayu ketika ia lewat sampai badannya hancur tinggal tulang yang kelihatan putih. Kecuali mukanya yang kelihatan masih utuh. Ada lagi seorang pemuda yang dimasukkan ke dalam plastik yang biasanya diisi dengan gula pasir yang beratnya 50 kilogram. Bukan sak [karung] tetapi plastik putih yang dipakai untuk kasih masuk pemuda itu. Kemudian plastik diikat, lalu disiram dengan minyak tanah, baru pemuda dibakar hidup-hidup. Setelah itu dia mati. Tetapi waktu itu sangat aneh, sebab walaupun sudah meninggal, ia masih berlutut dan tangan sebelah kanan tetap diangkat, padahal badannya sudah hangus. Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri perlakuan yang sangat sadis terhadap kedua laki-laki itu.

Akhirnya saya harus mencari suatu solusi, saya melarikan diri ke asrama Susteran di Ainaro untuk melanjutkan sekolah di SMPK

[Sekolah Menengah Pertama Katolik] di Ainaro. Saya bilang saya ada urusan sementara di Ainaro sehingga saya dapat izin ke sana, padahal saya melarikan diri ke sana dan berhasil bersekolah lagi, walaupun tidak lama...[ABRI] membuat surat pernyataan... [menuduh saya] ada hubungan dengan orang-orang Falintil... Kemudian mereka membawa surat palsu itu ke Kepala Sekolah... Jadi pada September 1982 saya ditangkap kembali di SMPK Ainaro oleh empat orang, yaitu dua orang anggota ABRI dan dua orang Hansip orang Timor, yang membawa saya ke Kodim Ainaro.

Sampai di Kodim Ainaro, Kasi Intel Kodim sedang pergi ke desa Cassa [Ainaro, Ainaro] sehingga saya harus tunggu sampai bapak itu datang. Ia langsung bertanya kepada anakbuahnya, "Ini yang namanya XH? Sekarang kamu tunggu, saya mandi dulu." Setelah ia mandi, saya dipanggil masuk, tidak ke ruangan interogasi, malahan saya dibawa ke kamar tidur Kasi Intel untuk diperkosa. Setelah itu mereka anggota intelijen mulai menginterogasi saya dengan bermacam-macam tuduhan: "Apakah kamu pernah membantu memberikan makanan kepada Falintil? Apakah rumahmu tempat pertemuan orang Falintil?" Namun saya tetap menyangkal, dan di situ mereka mulai menyiksa saya untuk kedua kalinya. Pada awalnya mereka merayu saya mulai dari kepala sampai kaki. Setelah itu mereka memukul kepala saya dengan kursi kayu sampai luka sehingga darah mengalir ke bagian muka serta baju saya. Sekaligus mereka memasukkan kabel listrik untuk menyetrum bagian dalam telinga saya. Tangan dan kaki saya juga disetrum. Setiap kali mereka menyodorkan pertanyaan, saya dibakar dengan puntung rokok, di mulut, di muka, atau di bagian lain badan saya, atau saya disetrum. Setelah saya tidak berdaya mereka memerkosa saya lagi. Kemudian mereka membawa saya ke WC di kantor Kasi Intel dan saya ditahan di situ selama tiga bulan. Setiap hari, pada saat mereka membuang kotoran, saya harus keluar...Buang air besar atau kecil, tidak pernah disiram dengan air. Di situlah saya tidur, makan, dan beristirahat selama tiga bulan. Makanan saya ditaruh di dalam kaleng bekas tempat susu kental yang kecil dan saya dapat itu sekali sehari. Air minum buat saya juga ditaruh di kaleng itu. Selama tiga bulan itu saya tidak pernah ganti pakaian dan tidak pernah mandi.

Pada suatu hari, semua anggota ABRI harus turun ke Dili untuk mengikuti suatu acara. Ketika mereka semua keluar, ada seorang Hansip orang Timor yang memanfaatkan kesempatan dan berusaha memerkosa saya. Ia mulai meraba saya dan bilang ia anggap saya sebagai istri kedua. Saya mengingatkannya, "Bapak sudah ada istri, saya juga sudah punya suami. Jangan perlakukan saya seperti orang pendatang. Nanti suami saya pulang dari Ataúro dan kita berjalan bersama-sama, bapak mau bilang apa?" Dengan cara itu

saya bisa mencegahnya memerkosa saya. Pada sore harinya ketika ABRI telah kembali dari Dili, seorang anggota Hansip melaporkan kepada mereka, “XH bilang sama saya ia mengingat suami Falintil di hutan.” Padahal saya tidak pernah omong demikian. Malam itu ABRI membawa orang tahanan, tujuh laki-laki dan dua perempuan, termasuk saya, untuk membuang kami di Builico [suatu jurang yang sangat dalam yang dikenal sebagai Jakarta II]. Sampai di Jakarta II, tujuh laki-laki itu disuruh berdiri di pinggir jurang dan didorong ke dalamnya, langsung mati. Waktu mereka mau dorong saya dan teman saya, kami pegang kaki mereka supaya kalau kami jatuh, kami jatuh bersama dengan ABRI. Seorang komandan bilang begini, “Bagaimana? Apakah kita mau bunuh mereka atau kita bawa pulang saja?” Seorang ABRI bilang lebih baik kami dibawa pulang saja, yang lain telah mati. Setelah pulang, saya dan teman saya langsung disiksa dan diperkosa.

Tiada hari tanpa pemerkosaan. Setiap saat, setiap hari, saya dan teman-teman diperkosa.

Pada suatu hari, seorang teman bernama Maria disuruh ke kantor Kasi Intel. Maria juga seorang tahanan ABRI. Waktu ia ke kantor Kasi Intel, ia melihat saya di WC, ia terus berbisik kepada saya melalui satu lubang kecil yang di tembok, “Lebih baik kamu mengakui apa saja yang ditanyakan oleh mereka supaya kamu cepat bebas dari sel WC ini. Apa saja mereka tanyakan, Anda setuju saja dan bilang bahwa saya, Maria, yang menjadi pemimpin Anda.” Akhirnya saya bilang kepada ABRI bahwa Maria adalah pemimpin saya. Setelah mereka dapat konfirmasi dari Maria mereka membebaskan saya dari sel WC dan memindahkan saya ke sel besi di mana saya tinggal selama tiga bulan sampai bulan April 1983 saya dibebaskan dan kembali ke Dare.¹⁸⁵

Perbudakan seksual pada masa konsolidasi pendudukan (1985-1998)

244. Dibandingkan dengan masa setelah invasi dan 1999, kasus-kasus perbudakan seksual yang dilaporkan selama periode tahun 1985-1998, seperti halnya kasus pemerkosaan, berada pada tingkat yang rendah. Hal ini bersamaan dengan menurunnya kasus-kasus penahanan perempuan.

245. Bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan suatu penurunan perbudakan seksual militer dan peningkatan kasus perbudakan seksual dalam rumahtangga, di mana seorang anggota angkatan bersenjata menggunakan kedudukannya dan senjatanya untuk memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seksual dalam situasi rumahtangga.

246. K adalah seorang korban perbudakan seksual dalam rumahtangga selama lima tahun, sejak 1985 sampai dengan 1989, yang dilakukan oleh komandan Koramil Laclubar (Manatuto). Awalnya, komandan yang bernama PS297, mendobrak pintu rumah K karena orangtuanya tidak mau membukakan pintu untuknya. PS297 memaksa K dengan ancaman senjata untuk membuka bajunya dan kemudian memerkosa K di rumahnya sendiri. Orangtua K tidak bisa menerima ini dan memukul K supaya ia menolak untuk berhubungan dengan PS297. Namun, PS297 terus menerus mendatangi rumah K dan berhubungan seks dengannya. Pada akhirnya K hamil dan melahirkan seorang anak yang meninggal tak lama setelah dilahirkan. Keadaan ini berlanjut selama lima tahun sampai PS297 kembali ke Sumatra setelah tugasnya berakhir di Timor-Leste.¹⁸⁶

247. Komisi juga menerima bukti bahwa perempuan diberikan untuk mencegah atau menghentikan penyiksaan terhadap anggota keluarga. N1, berasal dari Desa Bado-Ho'o (Venilale, Baucau), ditangkap oleh seorang Babinsa bernama PS298 pada Agustus 1986. Sebelum penangkapan, PS298 telah meminta kepada saudara perempuan N1 yang bernama N untuk melakukan hubungan seks dengannya. Karena ia menolak, PS298 membawa N1 ke sebuah pos militer untuk disiksa. Mereka menuduhnya sebagai anggota "Gerakan Pengacau Keamanan" (GPK) Fretilin. Mereka menendang dan memukul mulutnya dengan sebuah pistol sampai giginya rontok. Keesokan harinya N1 disuruh berdiri di bawah tiang bendera di depan pos, menatap ke matahari dari pagi hingga sore. Pada hari kedua N1 diancam akan ditahan dan disiksa selama satu bulan jika ia tidak menyerahkan saudara perempuannya. Pada akhirnya N terpaksa memasuki keadaan perbudakan seksual dengan PS298 untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya.¹⁸⁷

248. Sejumlah korban perbudakan seksual yang dilakukan oleh anggota tentara Indonesia juga menjadi sasaran kejahatan yang sama yang dilakukan oleh orang Timor-Leste dari kelompok-kelompok sipil. LI memberikan kesaksian bahwa ia mengalami perbudakan seksual yang dilakukan oleh seorang prajurit Koramil Laleia (Manatuto) yang bernama PS299 pada 1980. Pada 1986 ia kembali dipaksa mengalami perbudakan seksual oleh PS300 [orang Timor-Leste]. Ia adalah anggota Hansip dari markas Koramil Same. Dengan ancaman sepucuk senjata, LI diperkosa setiap malam di rumahnya sendiri. Pada akhirnya ia sendirian merawat dua orang anak hasil pemerkosaan, satu anak dari masing-masing pemerkosanya.¹⁸⁸

Kesaksian MI, Lalerek Mutin, Viqueque

MI adalah seorang perempuan bertubuh kecil, bersuara halus, yang tegar dalam mengungkapkan penderitaannya sebagai korban perbudakan seksual dalam rumahtangga kepada Komisi pada April 2003.

Setelah pemberontakan Hansip yang dipimpin oleh Komandan Ular dan diikuti dengan pembantaian Kraras di Desa Bibileo (Viqueque, Viqueque) pada September 1983, penduduk Kraras yang masih hidup,

kebanyakan perempuan, dipindahkan oleh tentara Indonesia ke satu desa bernama Lalerek Mutin. Desa ini kemudian dikenal dengan sebutan “desa janda”. Pada saat pembantaian Kraras, MI sedang hamil dua bulan. Ia dan suaminya lari ke hutan namun kemudian menyerah. Ketika anaknya berumur lima hari, suaminya keluar dari hutan.

Setelah ia menyerahkan diri...ia kembali ke rumah kami dan kami berkumpul lagi selama satu bulan. Pada Maret [1984] ia dipanggil oleh TNI untuk dijadikan TBO. Setelah ia pergi untuk lapor, suami saya tidak pernah kembali lagi. Mungkin pada malam ia dipanggil ia sudah dibunuh.

Ketika anak MI berumur empat belas bulan, ia jatuh sakit dan meninggal karena tidak adanya obat-obatan. Bersama dengan penduduk Lalerek Mutin yang lain, MI juga dipaksa menjadi anggota “Pasukan Tombak” yang ditugaskan melakukan ronda. Setiap malam, janda-janda anggota Pasukan Tombak diancam dan diganggu oleh para anggota ABRI.

Suatu malam ABRI mengadakan pesta. MI diperintahkan oleh PS 301, seorang Prajurit Dua dari kesatuan Nanggala III, untuk hadir di pesta itu. Dengan berbagai alasan, MI berhasil menolak sampai dua kali. Pada kali ketiga, tiga laki-laki datang ke rumah MI dan membangunkannya. Begitu datang, PS301 menuduhnya menyembunyikan seorang anggota “Gerakan Pengacau Keamanan” (GPK) di rumahnya. MI membantah. Setelah mengintimidasinya semalaman, pada pagi harinya PS301 memerintahkan MI kembali ke rumah dan menunggunya di sana. Setiba di rumah, MI mengambil air, sebilah pisau untuk memotong padi, dan tempat makanan serta pergi ke sawah bersama saudara sepupunya. Ia sangat lelah dan tertidur di sebuah pondok di sawah ketika saudara sepupunya bekerja di sawah. Tidak lama kemudian seorang anggota Hansip dan temannya orang Timor-Leste datang bersama dengan PS301 dan tiga anak buahnya yang datang ke rumah MI malam sebelumnya. Ketika mereka menemukan MI, PS301 mengambil kesempatan untuk “menangkap” MI dengan tuduhan bahwa di antara yang melarikan diri ada Komandan Ular, pemimpin pemberontakan yang menyerang pos Zipur di Kraras. PS301 kemudian menyerang MI.

Ia mulai menampar saya dan saya langsung jatuh. Waktu saya berusaha berdiri ia langsung menginjak dada saya dan saya terlempang kembali. Kemudian ia memukul pinggang. Setelah itu ia mengambil sebatang pohon singkong yang cukup besar...langsung ia pukul saya dengan kayu tersebut. Entah sampai berapa kali saya tidak hitung, yang jelas ia pukul saya sampai kayu habis patah di badan saya. Pada waktu itu saya tidak menangis, entah mengapa, tapi saya merasa mungkin saya akan mati saat itu juga. Setelah ia

selesai memukul saya, saya merasa muka saya bengkak. Saya berlari ke rumah dan mereka pun mengikuti saya sampai di rumah.

Sebelum PS301 sampai di rumah MI, kakak iparnya melaporkan kejadian kepada ketua Rukun Kampung (RK), ketua Rukun Tetangga (RT), dan seorang lagi yang berkumpul di rumah MI. Mereka melihatnya, tetapi hanya diam saja. Tidak lama kemudian PS301 juga sampai di rumah. PS301 meminta sebuah panci, terus ia sendiri memasak air untuk mengompres badan MI. Waktu PS301 keluar terjadi debat antara MI dengan semua orang Timor-Leste yang berkumpul di rumahnya.

...mertua saya, Kepala RK, dan RT mulai berkata kepada saya, "Tidak apa-apa. Kamu terima saja dia. Tidak ada orang yang akan menjejek kamu kalau kamu kawin dengan dia. Ini bukan karena kemauan kamu, tapi kita semua tahu bahwa ini terjadi karena terpaksa. Kalau kamu tidak mau, kita semua akan mati. Lebih baik menjual jiwa kamu untuk menyelamatkan leher kita." Saya menjawab, "Kalian bicara seperti itu, tapi bagaimana kalau nanti setelah situasinya sedikit normal? Oran tua saya akan datang dan bertanya pada kalian tentang saya, apa jawab kalian?" Mereka menjawab, "Kalau mereka nanti bertanya, kami ada kata-kata untuk menjawab mereka karena dengan situasi seperti ini kita tidak bisa ke luar ke mana-mana."

Setelah air yang tadi dimasak oleh PS301 menjadi panas, mereka semua mulai sibuk mengompres saya. Ada yang mengompres muka saya, ada yang mengompres tangan [dan] kaki saya sampai saya merasa baik dan badan saya yang bengkak itu mulai kempes. Setelah selesai, mereka semua pulang, kecuali PS301. Ia yang tetap tinggal di sana dan mulai hari itu juga kami berdua hidup sebagai suami istri selama satu tahun. Setelah itu ia pulang ke tanah airnya. Saya mengandung anaknya, tapi sampai tiga bulan lima belas hari hamil saya mengalami keguguran.

Pada 1991 pasukan Nanggala baru datang bertugas di Lalerek Mutin. Suatu hari ketika MI bersama temannya di sawah, seorang anggota pasukan, Prajurit Dua PS302 mengikuti MI dan ketika tiba di sawah ia menembak ke arahnya. MI dan temannya takut dan lari pulang. Sekali lagi, MI didorong oleh orang-orang di sekitarnya untuk menyerahkan diri kepada tentara Indonesia.

Di tengah jalan teman-teman saya bilang, "Kamu berikan diri saja pada dia. Kalau tidak, kamu akan mati." Kemudian karena merasa malu, saya berkata, "Biar saja. Saya akan memotong diri saya menjadi dua bagian. Bagian bawah saya berikan pada dia, tapi bagian atas untuk tanah saya, tanah Timor." Mereka berkata kepada saya, "Kamu jangan takut, jangan lari. Mungkin kamu harus

menderita oleh sebab suami kamu dibunuh, tapi kamu masih hidup. Tidak apa-apa. Hidup kita sama saja.” [PS302] mulai mengikuti dan berjalan bersama saya...ke rumah saya...Saya hanya menerima bahwa mungkin itu sudah menjadi nasib saya. Kami hidup sebagai suami istri dan saya mendapatkan seorang anak.

Pada 1993 MI sekali lagi terpaksa hidup bersama dengan seorang tentara bernama PS303 dari Yonif 408.

Dari hubungan kami saya mendapatkan seorang anak perempuan...[Ketika anak] baru berumur beberapa bulan saja, PS303 pergi. Setelah itu saya hidup dengan dua orang anak tersebut. Untung ada adik ipar perempuan saya...anggota keluarga dari suami saya yang pertama. [Ia] bersedia memelihara anak-anak saya sewaktu saya ke sawah.

Dulu yang bertugas di Lalerek Mutin adalah Yonif 514, 527, dan Batalion Linud 100. Saya dicurigai sebagai “buihu” [mata-mata] karena saya adalah istri tentara. Dibicarakan oleh masyarakat bahwa saya adalah perempuan yang tidak baik karena hidup dengan tiga laki-laki. Kadang-kadang saya merasa marah. Kalau mereka sedang membicarakan saya, saya langsung maki mereka. Saya bilang, “Kalau kamu bilang saya buihu itu bukan karena suami saya keluar untuk mencuri baru ia dibunuh. [S]uami saya bukan mengganggu istri orang, baru ia dibunuh. Kalau kamu mau bicara buihu, bilang pada orang lain. Kamu melihat saya adalah istri tentara itu benar, tapi apa yang saya pikirkan, kamu tidak tahu.” Setelah kejadian itu mereka tidak lagi berbicara tentang saya lagi.¹⁸⁹

249. Walaupun terjadi penurunan dalam jumlah laporan kasus perbudakan seksual selama “konsolidasi” pendudukan Indonesia, antara 1985 dan 1998, beberapa pernyataan di bawah ini menggambarkan bahwa perbudakan seksual dalam rumah tangga masih dilakukan oleh petugas keamanan Indonesia di seluruh wilayah ini.

250. Pada 1987 di Desa Matahoi (Uatolari, Viqueque), NI diancam dengan pisau untuk melayani kebutuhan seksual seorang anggota kesatuan Chandraça-7 Komando Pasukan Khusus bernama PS304. Karena dua anggota keluarganya masih berada di hutan, NI mengalami perbudakan seksual dalam rumah tangga. Ia melahirkan seorang anak hasil dari hubungan tersebut.¹⁹⁰

251. Pada 1988 OI dari Aicuris (Remexio, Aileu) didatangi oleh seorang Babinsa, PS305 [orang Indonesia], yang memakai seragam lengkap dan membawa sepucuk senjata. PS305 meminta OI kepada ibunya dan segera menyeret OI ke dalam kamar dan memerkosanya. Hubungan mereka berlanjut selama sepuluh bulan sampai anggota tentara itu menyelesaikan masa tugasnya. OI melahirkan seorang anak dari hubungan tersebut.¹⁹¹

252. Pada 1993 PS306 [seorang Indonesia], anggota Yonif 122 mendatangi rumah PI di Sananain (Laclubar, Manatuto). Anggota tentara itu memerkosanya dan sejak hari itu mereka hidup bersama. Pada akhirnya PI mengandung dan PS306 melantarkannya.¹⁹²

253. QI dari Lauana (Letefoho, Ermera) mengalami perbudakan seksual setelah seorang anggota milisi, PS307, mengancam orangtuanya dengan sebilah pisau pada November 1998. Karena saudara laki-laki QI adalah seorang anggota organisasi bawahan pro-kemerdekaan, QI harus melindunginya. Pada waktu ia mengandung dua bulan, PS307 memukulinya dan ia mengalami keguguran.¹⁹³

Perbudakan seksual oleh anggota Falintil

254. Komisi mendapatkan laporan tentang satu kasus perbudakan seksual yang terjadi pada masa pendudukan Indonesia yang dilakukan oleh anggota Falintil. Pada 26 Oktober 1996, RI dan adik perempuannya, SI, masing-masing berusia 14 dan 13 tahun, diancam dengan senapan dan granat oleh satu orang *estafeta*—PS308—dan dua orang anggota Falintil—PS309 dan PS310—di Manusae (Hatolia, Ermera). Setelah diancam, RI diperkosa oleh PS309 dan SI oleh PS310. Keadaan ini berlanjut sampai beberapa bulan hingga kedua gadis ini hamil. Kedua laki-laki itu selanjutnya menghilang.¹⁹⁴

Perbudakan seksual dan Jajak Pendapat (1999)

255. Kejadian-kejadian perbudakan seksual pada 1999 tidak dapat dilihat secara terpisah dari kasus-kasus pemerkosaan yang digambarkan dalam bagian sebelumnya. Komisi menerima bukti kuat yang menunjukkan situasi tidak berlakunya hukum yang tidak hanya memungkinkan terjadinya pemerkosaan secara sporadis tetapi juga memungkinkan para pelaku memerkosa seorang perempuan berulang-ulang selama berbulan-bulan. Para korban tidak punya cara untuk menghentikan kejahatan tersebut, atau jalan untuk menuntut keadilan.

256. TII, seorang perempuan dari Desa Mauabu (Hatolia, Ermera), mengungkapkan bagaimana seorang kepala desa dan seorang prajurit Kostrad (Rajawali) mendatangi rumahnya dan mengancamnya dengan senjataapi, karena anak perempuannya menikah dengan seorang anggota Falintil.¹⁹⁵ TII dipaksa mencari anak-anaknya yang telah melarikan diri ke hutan. Seorang anak perempuannya, TI, bersama seorang keponakan perempuannya, UI, pergi untuk membayar Rp1.000.000,00 kepada ABRI untuk “menyelamatkan nyawa mereka.”¹⁹⁶ Namun, TI dan UI ditangkap dan dibawa ke pos Rajawali di mana mereka dipaksa memasak selama satu bulan. Suatu malam Sersan PS311 [orang Indonesia] menodongkan sepucuk pistol kepada TI, memaksanya masuk ke kamarnya, dan memerkosanya. Seorang prajurit yang dikenal dengan nama PS312 melakukan hal yang sama terhadap TI. Kasus ini telah dilaporkan ke kantor polisi setempat di Ermera, tetapi polisi tidak melakukan tindakan. TI mengatakan:

Pada 22 Mei 1999 sekitar pukul 12 siang, Sersan Dua PS311 [orang Indonesia] dari BTT 144 datang ke rumah untuk memanggil saya dan keponakan saya UI karena dia sudah mendengar informasi adanya beberapa anggota Falintil yang sering makan dan menginap di rumah kami. Setelah membawa kami ke pos BTT, Sersan Dua PS311 tarik saya masuk ke salah satu kamar. Dia mengeluarkan semua pakaian saya secara paksa dan mengancam saya dengan pistol. Kalau saya tidak melayaninya maka dia akan menembak saya, sehingga saya rela menyerahkan diri demi keselamatan nyawa saya. Dia memerkosa saya...Sedangkan keponakan saya bernama UI dibawa oleh PS312, Prajurit Satu ABRI anggota Koramil 1637 [orang Timor-Leste]. Kemudian mereka menyuruh kami mencuci pakaian, setrika, memasak, seperti pembantu. Malam hari baru disuruh pulang ke rumah. Mereka mengancam orangtua kami, "Tidak boleh berbicara, kalau berbicara mereka akan mampus." Pada 25 Mei 1999...PS311 [kembali] menarik tangan saya masuk ke kamarnya dan dia mengeluarkan pakaian saya dan memerkosa saya...Kemudian pada 27 Juni 1999 kejadian terulang kembali...Tapi saya menolak dan Sersan Dua PS311 menampar dan menendang saya sampai jatuh. Dia menarik tangan saya dan saya berdiri bersama UI. Mereka bawa kami ke pos Batalion 144 untuk melayani mereka sebagai pembantu dan melayani nafsu berahi mereka. Kami melayani mereka dari tanggal 25 Mei 1999 sampai 27 Juni 1999.¹⁹⁷

257. Jauh sebelum pembantaian yang terjadi di Gereja Suai, milisi Laksaur telah melakukan berbagai tindakan teror seksual, termasuk perbudakan seksual. Pada 25 April 1999, milisi Laksaur menjadikan rumah VI di Fatumean, Covalima sebagai sebuah pos. Suaminya terpaksa melarikan ke hutan, sementara VI yang tertinggal terpaksa menjalani perbudakan seksual. Ia diperkosa berkali-kali oleh PS314 [orang Timor-Leste, milisi], dan pada saat PS314 tidak berada di tempat, anggota milisi yang lain, PS315 dan PS316 juga memerkosanya. Akibat dari kejadian ini VI hamil dan kemudian ia ditinggalkan oleh suaminya ketika mengetahui keadaannya.¹⁹⁸

258. Anggota milisi Laksaur yang lain, PS208, yang disebutkan terlibat melakukan kekerasan seksual dalam Pembantaian Gereja Suai setelah pemungutan suara, juga aktif terlibat dalam kekerasan seksual sebelum Jajak Pendapat. Pada 6 Juni 1999, PS208 masuk ke rumah WI di Desa Salele (Tilomar, Covalima) dengan mendobrak pintu. Ia mengancam akan membunuh WI dan ayahnya, dan kemudian memaksa WI melakukan hubungan seksual berkali-kali dengannya. Akibatnya ia menjadi hamil. Dua bulan kemudian ia berhasil lari menyelamatkan diri.¹⁹⁹

Pemeriksaan dan perbudakan seksual oleh milisi Halilintar di Atabae, Bobonaro*

Sudah sejak 1998, kelompok milisi Halilintar dan ARMUI (Aku Rela Mati untuk Indonesia) mengadakan kegiatan teror di Subdistrik Atabae, Bobonaro. Dari 13 kesaksian yang mengungkapkan terjadinya pemeriksaan dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini, Komisi menjadi yakin bahwa praktik pemeriksaan adalah bagian integral dari pola kekerasan. Pelaku yang berkali-kali disebut oleh korban-korban adalah PS318, wakil komandan Halilintar. Ia diduga telah terbunuh dalam tembakan dengan Interfet pada Oktober 1999.²⁰⁰ Pelaku lain yang juga kerap disebut adalah komandan Halilintar PS319. Namanya juga disebut dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Agung kepada Panel Khusus Pengadilan Distrik Dili untuk kejahatan terhadap umat manusia (penyiksaan, pemeriksaan, dan penindasan).²⁰¹

Halilintar memulai kegiatan-kegiatan terornya di Subdistrik Atabae pada 1998. Seorang anggota milisi Halilintar yang bernama PS320 masuk ke rumah XI di Bolo pada 5 Mei 1998. PS320 meletakkan pisaunya di meja, memaksa XI masuk kamar, dan memerkosanya. XI menggambarkan praktik seksual yang serupa perbudakan ini dengan kata-kata ini: "Pelaku menjadikan saya gundiknya dan setiap malam kira-kira pukul 9 ia datang dan tidur di rumah saya dan kami tinggal bersama seperti ini sampai 25 Oktober 1999."²⁰² Juga di Desa Bolo, YI diperkosa di kamar tidurnya sendiri oleh milisi yang bernama PS322. Ia tidak dapat menolaknya dan pemeriksaan itu terus berjalan dari 1998 sampai 26 Oktober 1999. Ketika itu istri PS322 melaporkan situasi ini kepada komandan Halilintar PS319. Karena laporan itu YI dipukul oleh PS319, yang berteriak, "Perempuan seperti ini sebaiknya ditembak kakinya, ditelanjangi, dan disuruh berjalan dari kampung Aidabasalala ke Coilima, Atabae." YI diharuskan membayar denda adat kepada keluarga istri PS322, seperti yang diharuskan adat dalam hal perzinahan. Tetapi hal ini tidak terjadi karena situasi bertambah buruk dan kebanyakan penduduk lari menyelamatkan diri.²⁰³

* Halilintar adalah satu kelompok paramiliter prointegrasi yang pertama kali didirikan pada akhir dasawarsa 1970-an atau permulaan dasawarsa 1980-an oleh João Tavares, seorang keturunan bangsawan Timor-Leste di Bobonaro. Awalnya anggota UDT, Tavares adalah salah seorang yang pertama didekati oleh Indonesia dan menjadi seorang komandan Partisan. Pasukan Partisan yang dipimpinnya kemudian menjadi Halilintar. Tavares menjadi Bupati Bobonaro pada akhir dasawarsa 1970-an. Halilintar dibubarkan pada 1983. Halilintar dihidupkan kembali pada 1994 sebagai satu kelompok milisi pada waktu gerakan bawahan kemerdekaan menjadi kuat di Bobonaro. Pada waktu itu Tavares juga membentuk beberapa kelompok milisi lain, termasuk ARMUI, di bawah komando milisi Halilintar. (Lihat Bagian 4: Rezim perbudakan).

Komandan PS319 mengancam ZI, dari *aldeia* Aidabasalala, Desa Hataz, dengan sepucuk senjata dan memerkosanya di rumahnya sendiri pada Februari 1999.²⁰⁴ ZI terus berada dalam situasi perbudakan seksual ini sampai Agustus 1999. Perbudakan seksual juga terjadi terhadap dua perempuan lain, AJ dan BJ. Sesudah suami AJ, seorang anggota Koramil Atabae, ditangkap karena dicurigai terlibat gerakan klandestin, AJ diperkosa oleh PS323, seorang anggota milisi. PS318 membantu pemerkosaan ini dengan cara mengancam AJ dengan sepucuk senjata.²⁰⁵

Ketika rumah BJ dirusak oleh milisi Halilintar pada 2 Februari 1999, ayahnya dipukuli karena ia berusaha menghalangi. Ia dibawa ke rumah sakit Maliana untuk mendapatkan perawatan. Ketika ayahnya sedang di rumah sakit, PS318 datang ke rumah BJ, memerkosanya dan memaksanya menjadi budak seks sampai ia melahirkan anak.²⁰⁶

CJ diperkosa pada saat milisi menyelenggarakan satu upacara sumpah setia kepada Halilintar di *aldeia* Kaitapo, Desa Aidabaleten, sebelum pemungutan suara. Dengan ancaman akan dibunuh, CJ dipaksa melakukan sumpah kesetiaan kepada Halilintar. Seperti yang diingat CJ, komandan PS318 “memerintah milisi Halilintar untuk memanggil saya. Karena saya menolak, PS324 mengancam saya dengan pisau...saya menyerah...” CJ diperkosa “selama tiga jam” sebelum ditinggalkan oleh PS318.²⁰⁷

Manuel Pereira memberikan kesaksian tentang serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh milisi Halilintar yang dialami dan disaksikannya. Pada 15 Maret 1999 Manuel didatangi di rumahnya di Sorohati, Desa Hataz (Atabae, Bobonaro) oleh anggota-anggota milisi Halilintar, termasuk Komandan PS319, PS318, dan PS323. Ia dibawa ke kantor desa di Hataz yang juga menjadi markas milisi. Setelah tiga bulan ditahan di markas milisi, ia selamat lolos dari percobaan pembunuhan. Selama masa ini ia juga menyaksikan PS318 memaksa seorang perempuan bernama DJ untuk berhubungan seksual dengannya. Karena takut, perempuan ini menerima PS318 untuk menjadi “suami”-nya, tetapi suami yang dipaksakan pada dirinya.²⁰⁸

EJ, yang suaminya telah melarikan diri ke hutan, ditahan di kantor desa Aidabasalala selama satu malam:

*Komandan PS319 mengancam saya. Saya hanya diam dan berdoa di dalam hati. Ia menodongkan pisau dan menyuruh saya melepaskan kain sarung yang saya kenakan. Saya menolak dan ia mengancam akan membunuh saya. Karena takut saya terpaksa menurutinya. PS319 langsung memerkosanya.*²⁰⁹

FJ, dari *aldeia* Loumeta (Ermera) mengungkapkan pemerkosaan berkali-kali yang dialaminya sebelum maupun setelah Jajak Pendapat. Pada 17 April 1999 FJ bersama dengan dua orang teman diculik oleh milisi dan dibawa ke rumah PS327 yang “menjadi markas di mana para milisi melakukan kejahatan.” Di situ FJ ditahan dan disiksa selama dua hari serta diperkosa oleh Komandan PS319. Setelah pemungutan suara, kekerasan seksual masih berlanjut menimpa FJ:

Para milisi memperlakukan kami yang menjadi korban pemerkosaan sebagai “istri simpanan” mereka. Setiap kali mereka membutuhkan kami untuk berhubungan [seksual] maka kami dibawa ke rumah PS327. Saya diperkosa enam kali. Yang pertama pada 4 September 1999 di pos BMP, pelakunya adalah PS327. Pemerkosaan yang kedua [terjadi] di rumah milisi PS407 di Madapau. Pemerkosaan yang ketiga [terjadi] di rumah PS408; yang keempat di pos milisi PS327; yang kelima di rumah PS409; dan yang keenam saya diperkosa di kantor desa Hataz.²¹⁰

Milisi Halilintar mula-mula mengobrak-abrik rumah GJ di Desa Saburapo pada 14 April 1999. Dua hari kemudian mereka kembali ke rumahnya dan membawanya pergi:

Tiga orang milisi yang tidak dikenal langsung menarik tangan saya dan membawa saya masuk ke rumah tetangga. Ketiga milisi tersebut menjaga di luar rumah, sedangkan milisi PS328 masuk ke dalam rumah itu, meletakkan senjata rakitan dan pisau yang dibawanya, dan membuka celananya. Ia menarik saya mendekat ke arahnya. Saat itu saya sempat memberontak namun ia memukul kepala saya dengan senjata G3 [senapan otomatis] sehingga saya terjatuh ke lantai. Lalu ia memerkosa saya sekitar pukul 10 malam.²¹¹

Sesudah pemerkosaan tersebut, GJ melarikan diri ke Maliana, namun PS328 mengejanya dan berhasil memerkosanya beberapa kali lagi, termasuk di kamp pengungsian di Timor Barat sesudah Jajak Pendapat. Dalam salah satu insiden pemerkosaan yang dialami GJ, PS328 ditemani oleh PS318 yang menjaga di luar rumah pada saat PS328 melakukan kejahatan ini.²¹²

Milisi Halilintar meningkatkan aksi kekerasannya segera sesudah Jajak Pendapat. HJ dari Desa Biadila (Cailaco, Bobonaro) diculik dari rumahnya pada 2 September 1999. Anggota milisi PS318 dan PS329, atas perintah Komandan PS319, mengikat HJ dengan tali, membawanya ke luar, dan melemparkannya ke tanah, di mana ia diperkosa oleh PS328.²¹³

PS6 juga terlibat dalam pemerkosaan terhadap seorang perempuan, IJ, dari *aldeia* Aidabasalala, sesudah penghilangan paksa terhadap suaminya. Pada 18 September, suaminya diambil dari rumahnya

oleh anggota milisi ARMUI. Sekitar seminggu kemudian PS318 dan anggota milisi lain datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa suaminya telah dibunuh:

Mendengar apa yang ia katakan saya langsung menangis, sedangkan milisi PS330 dari Tim Halilintar menarik tangan saya dan mencium saya. Saya membalasnya dengan menggigit pahanya. Dia mengatakan, "Malam ini juga saya tidur di rumah perempuan ini. Kalau perempuan ini tidak setuju, saya akan menembak mati dia." Ia masuk ke dalam kamar, sedangkan saya menangis. Adik ipar perempuan saya keluar dan mengatakan bahwa lebih baik saya "melayaninya". Mendengar omongan adik ipar, PS330 yang berada di dalam kamar langsung batuk-batuk. Saya akhirnya masuk ke dalam kamar. Ia langsung berdiri dan sambil memeluk dan mencium saya, ia membanting saya ke kasur di mana dia memerkosanya dua kali dalam semalam... [Sembilan hari kemudian] sekitar pukul 8 malam, PS330, yang memakai celana pendek, sepatu olahraga, dan membawa senjata G3, berdiri di jendela. Ia memanggil saya—saya sedang tidur pada waktu itu—dan mengatakan, "Pintu jangan ditutup. Kalau ditutup, kalian tahu akibatnya." Kemudian, ia datang ke rumah dan memerkosanya lagi.²¹⁴

PS318 dan PS319 terlibat bersama dalam kasus pemerkosaan berulang. Enam bulan sesudah rumah KJ dibakar pada Maret 1999, KJ ditangkap oleh milisi Halilintar pada 13 September 1999. Matanya diikat dengan kain hitam, lalu ia dipukul dan diperkosa oleh Komandan PS319. Pada 29 September, KJ kembali mengalami pemukulan, ancaman, dan pemerkosaan, kali ini oleh Wakil Komandan PS318. Ia melaporkan bahwa keesokan harinya, "pada tengah malam, milisi PS319 memukul, menampar, menendang, mengikat kedua tangan [saya] ke belakang, mengikat mata saya dengan kain hitam, kemudian memerkosanya di jalan raya dekat pos Halilintar."²¹⁵

Pada Oktober 1999, milisi Halilintar masih beroperasi, walaupun pasukan Interfet sudah masuk ke Dili. Pada suatu malam di bulan Oktober, kira-kira tengah malam, PS318, bersama PS331, PS332, dan milisi lainnya yang tidak dikenalnya, mendobrak masuk rumah LJ. Ia dibawa secara paksa ke pos Halilintar untuk diinterogasi tentang keberadaan suaminya yang telah melarikan diri ke gunung. Sesudah lebih daripada satu jam ditahan, ia diperkosa oleh PS318.²¹⁶

259. Setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat, kekerasan yang meluas dan pengungsian penduduk besar-besaran yang berlangsung sesudahnya memungkinkan terjadinya pemerkosaan. Dalam situasi kacau dan tanpa hukum, para pelaku pemerkosaan mempunyai kesempatan besar untuk memperoleh akses pada para korban dan menciptakan kondisi perbudakan seksual serta kondisi serupa perbudakan.

260. Di Aileu, seorang gadis berusia 17 tahun dari Desa Selo Kraik (Aileu Vila, Aileu) dipaksa menjalani perbudakan seksual selama masa setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat. MJ mengungkapkan bagaimana milisi AHI menyor semua orang: “[Mereka] berkata kami harus cepat mengosongkan [rumah kami] karena seratus pesawat tempur Indonesia [dalam perjalanan untuk] membakar semua rumah [di desa ini].” MJ bersama keluarganya mengungsi ke Aileu dengan maksud untuk pergi ke Atambua. Ketika di Aileu, MJ diperkosa untuk pertama kalinya:

PS333, seorang milisi yang juga anggota Kodim 1632 di Aileu mengancam ibu saya agar bisa bawa saya pergi. Karena takut akan ancaman tersebut ibu menyerah. Laki-laki itu membawa saya tinggal di rumahnya di Aileu Kota selama satu minggu. Pada 12 September ia masuk ke dalam kamar tidur saya sekitar pukul 8 malam dan memaksa untuk melakukan hubungan seks. Saya hanya pasrah karena melihat ia memakai seragam dinas dan membawa senjata. Saya rela diperkosa untuk menyelamatkan keluarga.²¹⁷

261. MJ diperkosa berulang-kali dan dipaksa pergi ke Dili bersama keluarga PS333. Pada suatu ketika, istri PS333 mengetahui apa yang telah terjadi dan mengusir MJ dari rumahnya. MJ dipindahkan ke Kupang, Timor Barat di mana akhirnya ia bertemu dengan keluarganya.

262. NJ bersama keluarganya bersembunyi di rumah mereka di Cassa, Ainaro, setelah memberikan suara dalam Jajak Pendapat. Seorang anggota Mahidi PS334 masuk ke dalam rumah NJ sambil membawa senapan. Untuk melindungi kedua adik perempuannya yang masih perawan, NJ terpaksa merelakan dirinya diperkosa oleh PS334. Situasi ini berlanjut selama beberapa minggu sampai akhirnya NJ mengajak keluarganya untuk melarikan diri ke Betun, Timor Barat. Tetapi di sana PS334 berhasil menemukannya kembali. Mendengar bahwa NJ sedang mengandung, PS334 membawanya ke Puskesmas di Betun untuk disuntik aborsi. PS334 tidak berhasil dan NJ masih mengandung ketika ia meninggalkan Timor Barat untuk kembali ke Ainaro.²¹⁸

263. Seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus di atas mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh milisi Halilintar dan pada waktu Pembantaian Gereja Suai, para korban perbudakan seksual di Bobonaro dan Covalima sering dipaksa mengungsi ke Timor Barat di akhir September 1999 oleh orang-orang yang sama yang menculik mereka sebelumnya. Kasus-kasus perbudakan seksual lainnya yang berlanjut di Timor Barat juga telah dilaporkan kepada Komisi. Setelah kekerasan di Gleno, Ermera, anggota milisi Darah Merah Integrasi yang terlibat dalam pembunuhan

terhadap ZE yang dikenal sebagai PS117 meneruskan perbuatan kekerasannya. Ia mengancam keluarga OJ1 dan pada akhirnya membawa keponakan OJ1, OJ. PS117 mengancam akan membunuh OJ jika ia menolak ikut ke Atambua, Timor Barat, karena ia adalah anggota organisasi Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor Timur. PS177 pada dasarnya menculik OJ sebagai hak milik untuk memberikan pelayanan seksual padanya di Atambua.²¹⁹

264. Dalam kasus PJ dari desa Metagou (Bazartete, Liquiçá), PS336, seorang anggota milisi Besi Merah Putih datang ke rumahnya pada 4 September 1999 dengan sepucuk senjata rakitan dan sebilah pisau *surik*. Ia memaksa PJ untuk menjadi “istri”-nya. Dua orang anggota milisi lain datang ke rumahnya dan turut mengancam PJ dan keluarganya. Karena takut, PJ terpaksa memenuhi tuntutan tersebut. Anggota milisi itu memaksanya mencuci baju untuknya. Beberapa hari kemudian PJ dan keluarganya diperintahkan pergi ke Atambua. Di sana PS336 menerapkan kepemilikan atas PJ dengan memerkosanya secara berkala selama empat bulan. Pada Februari 2000 PJ melarikan diri dari PS336 dan kembali ke Liquiçá.²²⁰

265. Pada 12 April 1999, pasukan Falintil melancarkan satu serangan di wilayah Subdistrik Cailaco, Bobonaro, yang mengakibatkan tewasnya sejumlah anggota tentara Indonesia dan milisi prointegrasi. Militer Indonesia dan milisi setempat membalas serangan tersebut dengan menjadikan penduduk sipil di Cailaco sebagai sasaran. Serangan ini mencakup pembakaran rumah, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan eksekusi di depan umum terhadap tujuh orang laki-laki. Pemerksaan dan perbudakan seksual juga terjadi dalam tindak kekerasan tersebut.²²¹ Prajurit-prajurit dari Koramil Cailaco, yang juga dikenal sebagai anggota milisi, memerkosa sedikitnya empat perempuan. Dua dari keempat korban dipaksa pergi ke Timor Barat sebagai pengungsi untuk kemudian menjadi korban perbudakan seksual di kamp pengungsi. Salah seorang korban mengenang:

Pada 12 April 1999, kedua kakak laki-laki saya dibunuh oleh milisi dari Cailaco, jadi saya berkewajiban melindungi anggota keluarga yang lain karena diancam oleh PS337 [seorang Timor-Leste anggota TNI]...Saya terpaksa menyerahkan diri untuk melayani pelaku [secara seksual]. Setelah itu saya pergi meninggalkan desa saya...Setelah hasil referendum diumumkan, PS337 mencari saya dan memaksa saya bersama keluarga untuk evakuasi ke Haekesak [Timor Barat]. Selama di tempat pengungsian, ia memaksa saya berhubungan badan dan saya dijadikan “istri simpanan”-nya.²²²

266. Terdapat sedikit dokumentasi mengenai kekerasan seksual dalam kamp-kamp pengungsi di Timor Barat sejak September 1999 sampai Januari 2000. Meskipun demikian, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh kelompok gabungan organisasi-organisasi nonpemerintah Timor Barat, Tim Kemanusiaan Timor Barat (TKTB), mulai Februari hingga pertengahan Mei 2000 menunjukkan tingginya tingkat kekerasan dalam rumahtangga di dalam kamp-kamp pengungsi, yang terutama dilakukan oleh orang-orang Timor-Leste anggota tentara Indonesia dan anggota

milisi yang efektif menguasai kamp-kamp tersebut.²²³ Dari 15 kasus poligami yang dilaporkan, sedikitnya sembilan mengisyaratkan terjadinya perbudakan seksual di mana seorang laki-laki membawa paksa dan menyatakan hak milik atas “istri” kedua (atau ketiga). Kebanyakan dari sembilan kasus ini telah dimulai pada saat kekerasan yang berlangsung sehubungan dengan Jajak Pendapat di Timor-Leste dan bukan dimulai di kamp-kamp pengungsian.

Bentuk-bentuk lain kekerasan seksual

267. Komisi telah menemukan bahwa bentuk-bentuk lain kekerasan seksual, khususnya penyiksaan seksual dalam penahanan, penghinaan seksual di depan umum, dan pelecehan seksual digunakan secara luas oleh pasukan keamanan Indonesia selama pendudukan. Penyiksaan seksual adalah satu cara yang efektif untuk mematahkan mental tahanan selama interogasi dan untuk menanamkan ketakutan di kalangan penduduk yang lebih luas. Penyiksaan seksual adalah suatu jenis khusus penyiksaan yang dilakukan dengan cara-cara seksual, atau dengan menasar seksualitas korbannya (mengenai definisi tentang penyiksaan lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan).

268. Penyiksaan, termasuk penyiksaan seksual dalam konflik bersenjata, adalah tindakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional Konflik Bersenjata, pelanggaran berat terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa, dan pelanggaran terhadap Hukum dan Kebiasaan Perang. Penyiksaan juga bisa merupakan kejahatan terhadap umat manusia.

269. Banyak dari kasus-kasus yang diuraikan dalam bagian tentang pemerkosaan dan perbudakan seksual di atas juga menggambarkan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual seperti penyiksaan seksual. Penghinaan seksual di depan umum digunakan sebagai cara untuk menerapkan kekuasaan dan dominasi terhadap penduduk sipil. Pelecehan seksual adalah ciri dari sejumlah penculikan yang dilakukan oleh militer. Pelecehan seksual juga merupakan suatu bentuk menonjol kekerasan seksual yang disampaikan dalam kesaksian-kesaksian para perempuan yang dipaksa menghadiri pesta-pesta yang diselenggarakan oleh militer dan kelompok-kelompok pembantunya. Di pesta-pesta ini mereka dipaksa berdansa dengan para laki-laki bersenjata dan menyerah pada pelecehan seksual yang dilakukan oleh para laki-laki itu.

270. Banyak korban laki-laki melaporkan bahwa mereka mengalami bentuk-bentuk kekerasan seksual ini, khususnya penyiksaan seksual, dalam tahanan.

Bentuk-bentuk lain kekerasan seksual dalam konteks konflik antarpantai

271. Satu-satunya kejadian kekerasan seksual selain pemerkosaan atau perbudakan seksual dari periode ini yang dilaporkan kepada Komisi adalah penyiksaan seksual terhadap seorang perempuan oleh anggota Fretilin pada 1977. Ayah dan paman VF1 adalah anggota UDT yang kemudian melarikan diri dari satu tempat penahanan Fretilin dan mencari perlindungan dari pasukan tentara Indonesia. VF1 dan anggota-anggota keluarganya yang lain dianggap sebagai pengkhianat oleh Fretilin. Akibatnya, mereka ditahan dan disiksa oleh para anggota Fretilin di Lacro, Manatuto, pada Mei 1977. VF1 menyampaikan kesaksian yang menyentuh tentang penyiksaan yang dialami oleh saudara sepupunya, WF, dan oleh bibinya.

Mereka mulai menginterogasi WF dan memukul serta menyundut seluruh badannya dengan besi yang telah dibakar di atas api sampai berwarna merah. Mereka memaksa sepupu saya untuk mengatakan bahwa dia tahu tentang keberadaan senjata dan pistol milik orang-orang UDT dan ABRI. Dia menjawab bahwa dia tidak melihatnya... Karena jawaban tersebut mereka memukul lagi dia sehingga dia terpaksa mengaku sembarangan bahwa dia tahu tentang keberadaan senjata tersebut...Begitupun tindakan mereka terhadap bibi saya yang dipukul, ditendang, dan dibakar dengan besi di seluruh tubuh termasuk alat kelamin. Kemudian bibi saya diikat dengan posisi tangan dan kaki diikat jadi satu, kemudian dia digantung dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas, selama satu hari penuh.²²⁴

Bentuk-bentuk lain kekerasan seksual selama pendudukan Indonesia (1975-1999)

Penyiksaan dan penghinaan seksual dalam penahanan

272. Komisi telah menemukan bukti bahwa pasukan tentara Indonesia mempraktikkan penyiksaan, perlakuan kejam, dan penghinaan yang bersifat seksual terhadap para tahanan laki-laki dan juga perempuan. Kekerasan seksual ini digunakan secara efektif untuk mendapatkan informasi dari para tahanan dan memaksa mereka memenuhi kemauan interogator. Metode-metode jenis kekerasan seksual ini yang dilaporkan kepada Komisi meliputi:

- menelanjangi tahanan pada waktu interogasi;
- menyundut dan menyetrum payudara dan alat kelamin;
- memaksa para tahanan untuk melakukan perbuatan seksual satu sama lain; dan
- mengambil foto para tahanan dalam pose-pose yang menghinakan, termasuk ketika telanjang.

273. Contoh-contoh berikut mengenai penyiksaan seksual, perlakuan kejam, dan penghinaan tidak mencakup pemerkosaan, walaupun dalam situasi-situasi tertentu pemerkosaan juga merupakan suatu bentuk penyiksaan sebagaimana yang dijelaskan di atas.

274. Menelanjangi para tahanan dan menempatkan mereka dalam suatu situasi kerentanan total merupakan suatu cara untuk mematahkan semangat mereka. Dimulai dengan penangkapannya pada akhir tahun 1975, RJ, seorang bibi dari pemimpin Fretilin RJ1, ditahan dan dilepaskan sekurang-kurangnya 20 kali di Baucau. Ia dicurigai sebagai seorang anggota Fretilin, seorang pemimpin Organização Popular das Mulheres Timor (OPMT – Organisasi Rakyat Perempuan Timor),* dan seorang komunis. Menurut pernyataannya, setiap kali sekelompok orang menyerahkan diri atau tertangkap, para interogator ABRI akan memanggil RJ untuk diinterogasi mengenai orang-orang yang baru ditangkap itu. Dalam interogasi yang berkali-kali dialaminya, militer menyuruhnya mengaku tentang keterlibatannya dalam Fretilin dan pesta-pesta dansa Fretilin, di mana setiap orang dituduh berdansa dengan badan telanjang. Ia berusaha tanpa hasil untuk mengatakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Ia menyampaikan kepada Komisi tentang interogasinya pada suatu malam di Hotel Flamboyan:

Kemudian sekitar tengah malam, ABRI datang ke rumah... “Kamu dicari komandan Kodim.” Saya pergi ke luar dan melihat sekitar sepuluh pria bersenjata telah siap di luar. [Setelah saya dibawa untuk diinterogasi] mereka bertanya, “Di mana G-3? Di mana dua granat itu? Di mana senjata-senjata?” Sebetulnya saya punya satu senjata, tapi saya berbohong. [Saya katakan] bahwa tidak ada senjata, bahwa saya hanya seorang perempuan dan tidak tahu bagaimana menggunakan senjata.

Saya melihat sebuah jarum suntik di atas meja kecil. Saya belum pernah melihat jarum suntik sebesar itu, 5 atau 10 cc. Saya curiga bahwa jarum [itu] digunakan untuk menyuntik binatang, tapi mereka menyiapkannya untuk saya... Mereka membanting saya ke tempat tidur, lalu merentangkan lengan saya, dan dengan jarum itu mulai mencari urat untuk menyuntik saya. Setelah suntikan dilakukan, saya langsung jatuh ke lantai dan saya bisa mendengar mereka tertawa. Mereka mengangkat saya, dan melemparkan saya ke sebuah tempat tidur kecil yang biasa digunakan oleh tentara ABRI. Saat itu saya tidak sadar tentang apa yang mereka lakukan terhadap saya. Saya hanya tahu bahwa tangan dan kaki saya kaku, dan saya hampir mati. Kemudian mereka melihat bahwa mata saya tidak berkedip. Satu orang mengambil lima butir pil lagi dan menjejalkannya ke mulut saya.

Setelah memasukkan pil itu ke mulut saya, mereka mulai melepaskan pakaian saya, satu demi satu. Pertama-tama mereka melepaskan

* OPMT berperan aktif dalam Resistansi dengan memberikan pendidikan politik di desa-desa serta menyediakan obat-obatan dan keperluan lain pejuang Falintil.

celana panjang saya dan tertawa. Lalu mereka melepaskan blus saya dan melemparkannya, mereka tertawa lagi. Mereka tertawa lagi saat melepaskan BH saya. Terakhir mereka melepaskan celana dalam saya, dan begitulah saya, terbaring telanjang seperti anak kecil. Air mata menetes ke muka saya, tapi saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa bergerak. Saya kira mungkin mereka ingin memerkosa saya, dan itulah mengapa mereka membaringkan saya telanjang di atas tempat tidur. Tetapi Tuhan mahapengasih. Saat saya...di atas tempat tidur, seorang anggota ABRI yang bernama PS338 [orang Indonesia] dari kesatuan Umi* masuk dan menginterogasi saya sambil saya telanjang. Dia membawa senjata SKS yang dia arahkan ke tenggorokan saya sambil berkata, "Kalau kamu tidak mau bicara, akan saya bunuh kamu." Saya ingin bicara, tapi mulut saya, tangan saya, kaki saya kaku...Tapi saya bisa mendengar dan mengerti segalanya. Saya gemetar seperti ayam akibat obat yang mereka suntikkan kepada saya. Saya merasa sangat sakit. Saat saya ingin membuka mata saya, saya dengar seorang komandan militer masuk dan menyuruh anak buahnya mengembalikan pakaian saya...Saya merasakan mereka mengangkat kaki saya, dan mereka tertawa karena saya telanjang. Mereka mengawasi saya sampai sekitar pukul 4 pagi, dan baru saat itu [mereka kembalikan pakaian saya]. Mereka tidak kembalikan jam tangan dan gelang emas saya.²²⁵

275. RJ ditahan selama empat hari, kemudian dilepaskan. Ia mulai memasak untuk acara-acara ABRI dan akhirnya tidak lagi menjadi sasaran untuk diinterogasi.

276. Kadang-kadang tahanan tidak ditelanjangi, tetapi dengan menempatkan mereka dalam suatu keadaan yang bertentangan dengan norma-norma budaya setempat, ini sama dengan kekerasan seksual. SJ dan suaminya ditahan pada Juli 1976 karena peran mereka sebagai pembawa pesan ("estafeta") antara gerilyawan Falintil di pergunungan dan para pendukung mereka di Baucau. SJ ditahan di tempat penahanan yang disebut Uma Lima (Rumah Lima) selama satu minggu, kemudian dipindahkan ke Hotel Flamboyan selama dua pekan. Di sana tahanan laki-laki dan perempuan diikat menjadi satu, saling berhadapan dalam posisi yang menyerupai persanggamaan:

Saya di sana tidak disiksa tetapi yang membuat saya hampir gila karena ABRI mengikat kami tahanan perempuan dan laki-laki dalam posisi berhadapan selama dua minggu. Kami baru dilepas saat ke kamar mandi, makan, dan interogasi. Selain dari itu kami diikat tapi dengan pasangan yang bergantian. Saya hanya pasrah...tindakan tersebut melanggar norma dan aturan adat Timor, apalagi saya sudah bersuami.²²⁶

* Umi adalah sandi panggilan radio untuk Nanggala 4, satu kesatuan dari Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha). Karena itu kesatuan Nanggala 4 juga dikenal dengan nama Umi. [Lihat Ken Conboy, *Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces*, Equinox Publishing, Jakarta dan Singapura, 2003, halaman 18].

277. Lebih sering terjadi, penghinaan dan penyiksaan seksual melibatkan penelanjangan dan serangan langsung terhadap organ-organ reproduksi. Setelah terjadinya satu serangan Falintil terhadap sebuah truk ABRI di Desa Guruca (Quelicai, Baucau) pada Juli 1977, TJ dan anggota-anggota keluarganya ditahan oleh tentara dan marinir ABRI. Suami dan ayah TJ diikat, kemudian dipukuli dan ditendangi sampai pagi hari di markas Pasukan Marinir (Pasmar) 9. Selanjutnya mereka dibawa ke Laga, di mana mereka digabungkan dengan empat tahanan lainnya. Di satu pos Marinir di Laga (sebuah gedung sekolah), TJ ditelanjangi, diinterogasi, dan disiksa secara seksual:

Saat kami tiba, tentara TNI [ABRI] mulai menginterogasi dan menyuruh saya. Mereka menyuruh saya melepaskan pakaian saya, dan membakar vagina saya dengan korek gas. Setiap hari selama minggu ini TNI [ABRI] memaksa saya melepaskan pakaian saya dan menyiksa saya.²²⁷

278. Pada 26 April 1981, UJ1 ditangkap oleh dua orang anggota Hansip atas perintah dari pemimpin Koramil di Quelicai, Baucau. UJ1 ditahan bersama dengan lima orang perempuan anggota keluarganya, UJ, VJ, UJ2, UJ3, dan WJ, serta beberapa orang lainnya. Ketika mereka tiba di Koramil, tangan UJ1 diikat ke belakang punggungnya, lalu ia dipukuli dan ditendangi. UJ dan FJ dibawa ke satu ruangan tersendiri, di mana dua orang tentara menelanjangi mereka, kemudian memukuli mereka dengan sebatang kayu dan menindih kuku kaki mereka dengan kaki kursi. Mereka juga menginterogasi UJ2 dan UJ3. Mereka menelanjangi WJ dan memaksanya duduk di dalam sebuah drum yang berisi air. Kemudian mereka menyundut bagian-bagian tubuhnya, termasuk payudaranya, dengan rokok.²²⁸

279. Di Dili, XJ menjelaskan bagaimana dirinya ambil bagian dalam satu serangan Falintil pada 10 Juli 1981, yang kemudian dikenal sebagai serangan Marabia (lihat Bagian 3: Sejarah konflik). Ia ditangkap dan dilepaskan keesokan harinya, tetapi kemudian ditangkap kembali pada 12 Juli. Ia dibawa ke Mess Korem, di mana ia dipukuli dan disiksa. XJ bekerja sebagai pengemudi mobil seorang pastor setempat; orang-orang yang menginterogasinya menanyainya tentang keterlibatan Gereja dalam mendukung gerakan kemerdekaan:

Pada 29 Juli [1981] militer membawa saya ke luar lagi. Mereka melepaskan celana saya hingga telanjang dan memasukkan saya ke dalam sebuah tangki, bersama dengan seorang [laki-laki] Timor yang tidak saya ketahui asalnya dan saya juga tidak tahu mengapa ia dimasukkan ke dalam tangki dengan saya. Mereka mengikat kami, dan kemudian mengikat alat kelamin kami menjadi satu. Setelah itu mereka mulai memukuli saudara yang satu itu, sehingga menarik tali yang mengikat alat kelamin kami menjadi satu, membuat saya merasa sakit sekali. Saya harus mengikuti ke mana ia bergerak karena alat kelamin kami terikat menjadi satu. Setelah ini, kami diikat bersama lagi pada pukul sembilan pagi. Waktu itu udara panas sekali, kami

dibawa dan ditempatkan di atas batu di bagian yang berpasir di Mess Kodim, selama hampir satu jam, kemudian kami berdua dibawa masuk kembali ke gedung.²²⁹

280. Keesokan harinya XJ dipindahkan ke Penjara Balide, di mana ia ditahan di dalam sel isolasi selama sekitar sepuluh hari. Pada 3 September 1981, ia dinaikkan ke sebuah kapal yang diberangkatkan ke Ataúro.

281. YJ, dari Desa Fuat (Iliomar, Lautém), mengisahkan kepada Komisi tentang penyiksaan seksual yang dialaminya pada 1982:

Pada September 1982 saya ditangkap oleh tentara Indonesia kesatuan [Batalion] 320 karena mereka curiga saya membawa makanan dan informasi untuk Fretilin di hutan. Mereka membawa saya ke Koramil 03 Iliomar untuk diinterogasi oleh Danramil PS339 [orang Indonesia] dengan jurubahasa yang bernama PS390 [orang Timor-Leste]. Selesai itu mereka membawa saya ke satu tempat [aldeia] bernama Paitomar [desa Iliomar I, subdistrik Iliomar, Lautém]. Sampai di sana saya ditelanjangi, disuruh berbaring di atas tanah, dan ditaruh batu besar di atas perut [saya], lalu dipukul dengan senjata. Tak lama kemudian saya digantung di sebuah pohon. [Mereka] memaksa seorang perempuan yang juga dicurigai [mendukung perjuangan kemerdekaan] untuk memegang alat kelamin saya, lalu digoyang-goyang dan diisap-isap serta dimainkan-mainkan. Badan saya dibakar dengan api...²³⁰

282. ZJ dari Cairui (Laleia, Manatuto) ditangkap pada 1982 oleh anggota Hansip yang dikenal bernama PS341 dan PS342. Mereka membawanya dengan berjalan kaki ke markas Koramil. Di sana ia diinterogasi oleh PS338, juga seorang anggota Hansip, dan disiksa oleh PS341 dan PS338. Mereka menelanjanginya, dan memukuli serta menendangnya sampai ia hampir pingsan. Mereka mengikatkan sebuah batu ke alat kelaminnya. Penyiksaan ini berlangsung mulai pukul 07.00 sampai pukul 16.00. ZJ ditahan di markas Koramil ini selama satu tahun.²³¹

283. Tahanan perempuan sering mengalami penghinaan seksual. Karena suami O1 adalah seorang gerilyawan di hutan, maka para prajurit ABRI, termasuk satu orang yang dikenal korban sebagai PS334 [orang Timor-Leste], mendatangi rumah O1 di Ainaro pada 1982. Para prajurit itu membunuh saudara laki-lakinya, dan kemudian memukuli, menelanjangi, dan memerkosanya ipar perempuannya, O. Setelah pemerkosaan itu, O dan O1 dibawa ke markas Kodim di Ainaro, di mana seorang petugas intelijen menginterogasi mereka.

Setelah itu saya dan O dibawa untuk ditahan di Kasi I Ainaro. Di sana kami ditahan bersama dengan korban lain...Kami ditahan selama satu bulan di ruangan Kasi I, dan tidak boleh keluar dari tahanan. Apabila di antara kami ada yang haid, terpaksa pakaiannya dicuci dengan air lalu

langsung dipakai kembali walaupun dalam kondisi sedikit basah. Selama di tahanan kami diinterogasi oleh PS334. Ia selalu membawa pisau yang ditusuk-tusukkan sekitar mulut dan perut bagian bawah [kami]. Pada suatu hari saya dan O dipisahkan dari tahanan yang lain, dan dimasukkan dalam salah satu WC selama dua hari dua malam.²³²

284. Pada 1983, AK ditahan di Hato-Udo (Ainaro) karena dicurigai telah berhubungan dengan Falintil. Ia berhasil melarikan diri, namun ditangkap kembali di Mau Ulo (Ainaro) oleh sekitar 50 orang anggota tentara dari Yonif 744. Setelah tentara menahannya selama dua hari di markas Yonif 744, mereka membawanya untuk menemui komandan Kodim Ainaro, yang membenarkan bahwa AK memang orang yang mereka cari. AK kemudian ditahan di markas militer di Ainaro tersebut. AK menyampaikan kepada Komisi:

Tiba di sana seorang tentara bernama PS345 langsung memukul saya. Saya ditampar, dipukul, dan ditendang...Pada malam hari ia menyuruh saya untuk melepaskan semua pakaian saya...kemudian ia memasang kabel listrik pada rambut saya, telinga, leher, sepuluh jari tangan, alat kelamin, dan sepuluh jari kaki saya. Kemudian PS229 [Orang Indonesia] membuka kontak listrik dan saya disetrum dari pukul 8 malam sampai pukul 1 dini hari...Saya ditahan di Ainaro selama satu bulan satu minggu. Mereka juga menangkap dua perempuan yang berpakaian kain kebaya, dibawa kemari dari Zumalai [Covalima], karena dicurigai memberikan bantuan makanan kepada Falintil di hutan. Mereka diinterogasi oleh PS229, dan kemudian PS345 memaksa kedua perempuan itu untuk melepaskan semua pakaian. Setelah mereka telanjang, saya dipaksa untuk memasang kabel listrik pada tubuh kedua perempuan tersebut. Selanjutnya PS229 dan PS345 menyalakan listrik menyetrum mereka. Di tempat itu kemudian oleh PS229 dan anggota Nanggala, kedua perempuan tersebut diperlakukan seperti "istri" mereka.²³³

285. Di Mehara (Tutuala, Lautém), militer Indonesia melakukan pembalasan keras terhadap para perempuan yang ditinggalkan oleh putra dan suami mereka yang bergabung secara massal dengan Falintil pada Agustus 1983. BK bersama temannya, P, dan anak laki-lakinya ditahan. BK menguraikan bagaimana kekerasan seksual digunakan untuk menyiksa dirinya:

Pada 9 Agustus 1983, para anggota Wanra, Hansip, kepala desa, dan semua warga desa laki-laki mengungsi ke hutan. Maka setelah dua bulan tentara dari kesatuan Linud 100 [Batalion Lintas Udara dari Sumatra] memerintahkan semua perempuan yang suaminya lari ke hutan agar berkumpul di desa. Setelah semua perempuan berkumpul mereka berkata, "Semua boleh kembali ke rumah masing-masing kecuali P dan BK, mereka tetap di sini supaya mereka diperiksa dulu."

Lalu kami dibawa ke pos. Kami tiba di pos pada pukul 6 malam. Mereka langsung menginterogasi saya dan teman saya, P. Mereka bertanya, “Mengapa suami kamu lari ke hutan?” Kami jawab, “Kami tidak tahu mengapa mereka lari ke hutan.” “Mengapa kalian tidak tahu sedangkan mereka suami kalian? Kamu GPK! Komunis!” setelah itu mereka mulai memukul kami, menelanjangi kami dari pukul 6 malam sampai 1 pagi. Mereka memukul dengan kayu balok, menendang, menelanjangi kami, mengancam kami dengan senjata, menyuruh kami untuk mengaku. Tetapi kami tidak mengakui apa-apa karena kami memang tidak tahu apa-apa. Kasi I mencabut bulu kelamin saya satu per satu supaya saya merasa kesakitan, dan kalau saya tidak tahan dengan sakit saya akan mengaku apa saja yang saya ketahui. Tetapi memang karena saya tidak tahu apa-apa saya tetap diam saja. Melihat itu mereka semakin marah dan memukul saya sampai hidung dan mulut saya keluar darah. Sampai pada pukul 1 pagi mereka berhenti menyiksa saya. Kemudian mereka menyuruh saya dan teman saya P makan, tetapi saya tidak mau karena saya merasa seluruh badan saya sakit karena mereka menusuk seluruh badan saya sampai berdarah-darah dengan duri pohon aren.²³⁴

286. Meskipun dilepaskan setelah malam itu, BK ditahan sekali lagi oleh BTT 641 dan dikurung dalam sebuah rumah adat di Mehara selama enam bulan.

287. Tidak seperti banyak perempuan dari *aldeia* Maluro, Desa Lore (Lospalos, Lautém), yang mengalami perbudakan seksual selama berlangsungnya operasi-operasi militer skala besar di wilayah itu yang telah diuraikan di atas, CK berhasil lolos dari pemerkosaan. Tetapi, ia mengalami penyiksaan dan pelecehan seksual:

*Pada 11 Oktober 1983 kami ditangkap oleh pasukan [Batalion] 744 ABRI bersama Hansip. Saya diserahkan ke pasukan yang pada waktu itu bertugas di pinggir hutan. Setiap malam kami diinterogasi. Kalau jawaban kami tidak betul, kami dipukul. Saya dipukul di paha, ditendang di paha, kemudian mereka duduk di atas kaki saya pakai kursi. Pada waktu pertama kali kami diserahkan ke pasukan [yang sedang melaksanakan operasi] di hutan, kami diinterogasi selama satu minggu. Dalam interogasi tersebut ABRI selalu meraba saya mulai dari ujung kaki hingga kepala dan mencubit buahdada saya, tetapi mereka tidak memerkosa saya. Setelah itu, mereka membiarkan kami begitu saja. Selama satu bulan lebih di sana kami tidak diinterogasi atau dilecehkan.*²³⁵

Kesaksian DK, Mehara, Tutuala

DK memberikan kesaksian mengenai hilangnya suaminya dan bagaimana dirinya menjadi korban kekerasan seksual:

Suami saya adalah seorang guru sekolah dasar di Poros Mehara [Tutuala, Lautém] dan pemimpin organisasi klandestin yang bernama Lorico Assuwain. Pada 1983, secara serentak sekelompok Hansip dari Poros lari ke hutan untuk bergabung dengan Falintil. Setelah beberapa minggu, Komandan Satuan Tugas di Tutuala memaksa suami saya untuk ikut operasi “pagar betis” selama satu bulan untuk mencari Hansip yang lari itu.

Pada 13 November 1983, tiga anggota Hansip yang sudah kembali dari hutan untuk bekerja kembali dengan ABRI [Batalion] 641 di Poros datang ke rumah untuk menangkap suami saya. Beberapa hari kemudian tiga anggota Hansip bersama dua orang tentara 641 datang ke rumah kami untuk mencari dokumen-dokumen klandestin, tapi tidak menemukannya karena sebelumnya semua dokumen itu saya sudah sembunyikan. Terus [saya] disuruh ke pos 641 di Laluna Lopo, Poros, untuk memberi keterangan. Jadi pada malam hari saya menggendong anak saya, yang pada saat itu berumur tiga bulan, dan kemudian menuju ke pos 641.

Saya ditanya oleh pemimpin pos 641, “Apa kamu tahu tentang keterlibatan suamimu dalam klandestin? Kamu pernah bertemu Fretilin?” Saya menjawab “tidak” untuk semua pertanyaan ini. Lalu disiapkan tiga tempat tidur untuk saya, anak saya, dan satu lagi untuk teman yang pada saat itu sedang hamil. Pada tengah malam kemudian seorang tentara mulai memeluk saya, menciumi, dan melumat bibir saya, kemudian menyuruh agar saya memegang alat kemaluannya. Kemudian dia memegang kemaluan saya sambil berkata, “Kemaluan saya sama dengan kemaluan suamimu. Mengapa kamu menolak saya?” Saya menjawab, “Saya tidak dipanggil ke sini untuk melakukan perbuatan seperti ini. Kalau ingin bertanya sesuatu mengenai keterlibatan suami saya, silakan.” Setelah dengar jawaban tersebut, dia melepaskan pelukannya. Ini dilakukan selama dua malam, tetapi tidak bersetubuh.

[Berbeda dengan] teman saya yang pada saat itu sedang hamil... [Salah satu dari tentara itu] mulai meremas dan memukul perut teman saya agar anak yang ada dalam [kandungannya] mati dengan alasan anak yang ada dalam kandungannya adalah hasil hubungan gelap dengan suaminya yang telah lari ke hutan. Meskipun begitu hingga hari ini anak tersebut masih hidup tetapi cacat di bagian muka...Pada malam ketiga, kami disuruh pulang ke rumah. Setelah saya pulang, suami saya mengatakan kepada

saya, “Istriku, saya akan pergi ke pos untuk menghadapi tentara 641. Saya [yakini] tidak akan kembali lagi. Anak saya hanya satu, biarkanlah kelak dia mengganti diri saya. Mungkin juga setelah kepergian saya kalian dijadikan pelacur tentara 641. Tapi berbesar hati dan bersabarlah, sebab semua ini terjadi karena konflik politik, dan demi pembebasan diri dari penjajah. Kalau kami pergi dan tidak kembali, carilah jejak kami, sebab suatu saat semua orang akan menanyakan tentang kami. Biarlah kalian menjadi saksi untuk kami sebab kami bekerja demi tanah air ini.” Setelah berpesan ini, suami saya dibawa pergi ke pos 641 di Lualaba Lopo.

Setelah suami saya diambil ke pos, sudah ada beberapa teman lain, dan mereka bersama suami saya diantar ke Kodim 1629 di Lospalos. Setelah kejadian ini, suami saya dan dua temannya tidak kembali sampai hari ini. Ada satu [teman] lain yang dibebaskan dan tinggal di Poros, Mehara.

Anak saya yang berumur tiga bulan meninggal setelah kena sakit malaria selama dua malam kami berada di pos militer 641.²³⁶

288. Pada 14 Oktober 1991, EK ditangkap karena dicurigai telah mencuri dokumen-dokumen rahasia dari kantor Korem, di mana ia telah bekerja sebagai asisten administratif selama 10 tahun. Mula-mula ia ditahan dan disiksa di kantor Danton Intel (Komandan Peleton Intelijen). Meskipun tidak pernah diperkosa, namun ancaman pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penghinaan seksual merupakan bagian dari strategi yang dimaksudkan untuk menerornya dan mematahkan perlawanannya selama interogasi. Selain ancaman kekerasan seksual, EK juga dipermalukan. Selama tiga hari pertama interogasinya, ia tidak diperbolehkan mandi ataupun berganti pakaian, padahal ia sedang menstruasi. Ia mengungkapkan kepada Komisi:

Seorang intel dari Nusra Bakti [di Dili], ia seorang kapten saya sudah lupa namanya, ia menginterogasi saya dari pukul 02.30 sampai pukul 6 pagi. Saat itu ia membawa seekor ular yang ia masukkan ke dalam karung. Pada saat itu saya tidak berbicara banyak dan hanya menjawab tidak tahu, ia mencoba membuka kancing baju saya... [Kemudian] kapten itu mengambil pistol dan menodongkan ke kening saya. Setelah itu saya pingsan. Saat saya sadar dan bangun ular yang tadinya berada dalam karung tersebut sudah melilit di tubuh saya... Namun ular tersebut tidak menggigit saya [mungkin] karena saya selalu berdoa di dalam hati. Kemudian ular tersebut turun dan merayap menuju pemiliknya. Setelah berada di tubuh pemiliknya ular tersebut langsung membuang kotorannya di tubuh pemiliknya dan kemudian ia merayap masuk lagi ke dalam karung...Selama interogasi intel dari Korem tidak berbuat hal-hal yang jahat terhadap saya tetapi yang dari Nusra Bakti selalu melakukan pelecehan seksual terhadap saya.

*Mereka memasukkan kakinya ke dalam rok saya, mau melepaskan pakaian saya, tetapi saya tidak pernah membiarkannya.*²³⁷

289. Setelah mendapat kunjungan dari Palang Merah Internasional, EK secara diam-diam dipindahkan ke Polsek (Kepolisian Sektor) Dili Barat. Menurut EK, kepala kepolisian di situ adalah seorang laki-laki yang baik, yang menyembunyikan kunci pintu selnya sehingga orang lain tidak bisa masuk ke sel itu pada malam hari. Setiap malam, para anggota tentara dan petugas intelijen mencaci-maki dari luar selnya. Ia melanjutkan:

*Seorang tentara dari [Batalion] 744 yang diangkat menjadi intel, ia biasa dipanggil PS347 [orang Timor-Leste], saya dengar berbicara, "Ayo buka pintu kita masuk rame-rame serbu dia di dalam." Setelah berkata begitu mereka datang mendobrak pintu. Setelah itu mereka mencari kunci di dalam sebuah kotak P3K [Pertolongan Pertama pada Kecelakaan]. Dari kotak tersebut mereka menemukan sebuah kunci lalu mencoba membuka pintu sel saya tapi tidak terbuka, mereka berkata, "Hari ini kami tidak sempat makan daging kamu, tapi besok kami akan datang lagi."*²³⁸

290. Ancaman-ancaman itu terus berlangsung setiap malam. Anggota-anggota tentara mengancamnya dengan sepucuk senapan, memanggil namanya dengan kata-kata yang jelas-jelas seksual, dan bahkan memukuli seorang laki-laki muda yang ditahan di dalam sel di samping sel EK, yang turut menambah ketakutannya. Akhirnya, seorang Timor-Leste petugas polisi menyelundupkan sepucuk surat dari EK kepada keluarganya. Keesokan harinya, staf dari Palang Merah Internasional datang dan berhasil memindahkannya ke Penjara Becora. Di sana keadaan sedikit membaik, walaupun ia masih selalu dilecehkan oleh petugas-petugas intelijen dari Nusra Bakti. Pada Januari 1992, EK, pamannya, dan ipar laki-lakinya diadili dan dijatuhi hukuman penjara enam tahun. Ia dilepaskan pada 1997.

291. Penyiksaan yang menggunakan kekerasan seksual dan ancaman kekerasan seksual terhadap mereka yang berada dalam penahanan tidak hanya dipraktikkan oleh militer Indonesia, tetapi juga oleh polisi Indonesia. Pada Oktober 1996, setelah seorang pedagang, yang oleh Falintil diyakini sebagai seorang petugas intelijen Indonesia, dibunuh, FK, GK, HK, IK, dan dua orang laki-laki lain ditangkap oleh polisi di Ermera. Enam laki-laki itu dibawa ke markas kepolisian di Gleno (Ermera). Di sana para polisi memaksa para laki-laki itu telanjang. Kemudian mereka memukuli para laki-laki itu di bagian kepala dan badan, dan menarik alat kelamin mereka dengan keras. Alat kelamin IK dipukuli sampai bengkak. Polisi juga menyetrum seluruh tubuh para laki-laki itu. HK dipaksa memakan seekor kadal hidup dan digantung dengan kaki di atas dan kepala di bawah dalam keadaan telanjang. Alat kelaminnya dilumuri getah suatu bunga yang membuat gatal. GK1 dan JK, orang tua GK, juga ditangkap. JK diinterogasi dan pakaiannya dilucuti sampai nyaris telanjang. Ia diharuskan memberikan uang Rp900.000,00 serta kambing, ayam, dan jagung kepada polisi. Pada akhirnya, enam orang laki-laki

tersebut diadili dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Mereka melarikan diri dari penjara pada 1999.²³⁹

Mengambil foto para tahanan

292. Foto-foto tubuh para lelaki dan perempuan yang telanjang, disiksa, dan dibunuh juga merupakan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang dimaksudkan untuk merendahkan martabat korbannya dan menanamkan teror pada orang-orang yang menyaksikannya. Komisi telah meneliti foto-foto yang memperlihatkan tubuh para perempuan yang telanjang, memar lebam, dan berdarah, namun wajahnya ditutupi. Juga tampak pada foto-foto itu, betis dan kaki orang-orang yang berpakaian seragam dan sepatu bot tentara. Foto-foto ini pertama kali diperoleh dan disebar di Timor-Leste pada November 1997 oleh ETISC (East Timor International Support Centre – Pusat Dukungan Internasional Timor-Leste), satu organisasi di Australia yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste. ETISC mendapatkan sekitar 40 lembar foto yang secara eksplisit menunjukkan tubuh-tubuh yang disiksa dari kemungkinan lima perempuan. Kesaksian yang diperoleh Komisi mengindikasikan bahwa pengambilan foto para laki-laki dan perempuan korban penyiksaan dan pemerkosaan itu adalah perbuatan pasukan keamanan Indonesia.^{*}

293. Kasus-kasus berikut ini tidak hanya memberikan bukti tentang para tahanan yang difoto, tetapi juga menunjukkan bagaimana penyiksaan dan penghinaan bersasaran seksualitas sering berkaitan erat dengan tindakan pemerkosaan atau perbudakan seksual.

294. Pada 1977, seorang penerjemah ABRI, PS348 [orang Timor-Leste], mengambil KK dari rumahnya. Mula-mula ia dibawa ke Koramil, dan kemudian dipindahkan ke suatu tempat penahanan di Dili yang dikenal dengan nama Sang Tai Hoo. KK menyampaikan kepada Komisi tentang pengalamannya ditelanjangi, disiksa, dan kemudian diambil fotonya. Ia juga mengalami pemerkosaan setiap hari, dan akhirnya membuat pilihan sulit untuk memasuki suatu hubungan dengan seorang perwira ABRI:

Di dalam interogasi tersebut saya disiksa seperti dipukul dengan ikat pinggang. Mereka memaksa saya untuk mengaku bahwa saya melakukan kontak dengan orang Falintil dan terima surat dari orang Falintil. Tetapi saya tidak mengaku. Pada hari kedua tanggal 30 Januari 1977, pada siang hari saya diinterogasi lagi oleh intel Sang Tai Hoo... Dalam interogasi tersebut mereka menelanjangi saya dan menyundut alat kelamin saya dengan puntung rokok, saya juga disetrum dengan listrik. Pada saat saya ditelanjangi, mereka ambil foto. Saya diperkosa oleh ABRI yang selalu mengatakan bahwa kalau saya tidur dengan mereka saya dapat pulang ke rumah. Karena saya menolak, mereka menendang saya. Di Sang Tai Hoo saya ditahan selama 25 hari.

* Komisi memiliki lembaran foto-foto tersebut. Untuk menghormati martabat para korban, Komisi memutuskan untuk tidak memublikasikan kembali foto-foto tersebut dalam Laporan ini atau terbitan lainnya.

Pada 14 Februari 1977 saya dipindahkan lagi ke Penjara Balide sekitar pukul lima...Di sel umum [Balide] saya bertemu dengan dua teman saya, yaitu LK dan MK...tidak sampai satu minggu kami dipindahkan lagi. Sebelum kami pindah, kami dibawa ke salah satu kamar di Penjara Balide di mana mereka memasukkan paku ke dalam baju kami. Setelah itu kami diperkosa sampai pagi. Akhirnya pada pagi hari itu juga kami dipisahkan. Mereka berdua ke Sang Tai Ho dan saya tetap di Penjara Balide. Di sana saya bertemu lagi beberapa perempuan Timor yang baru menyerah, yang saya tidak tahu namanya. TNI [ABRI] menyuruh kami mandi di luar dalam keadaan telanjang. Setelah selesai mandi, mereka pindahkan lagi saya ke sel umum.²⁴⁰

295. Penahanan KK berhenti pada 1980 ketika ia menyetujui suatu hubungan seksual dengan seorang Letnan Kolonel bernama PS349 [orang Indonesia]. Ia melahirkan seorang anak dari hubungan ini.

296. Pada 1982, NK berumur 14 tahun saat ia ditangkap oleh tentara Indonesia ketika sedang berlangsung operasi militer setelah pemberontakan Mau Chiga (Hato Builico, Ainaro) (lihat studi kasus Mau Chiga, paragraf 211 – 217). Setelah dua minggu bersembunyi di dalam satu gua di Gunung Kablaki, NK, bersama ayah dan kakak laki-lakinya, ditemukan dan ditangkap. NK ingat bahwa ia difoto ketika mengalami penghinaan dan perlakuan kejam di hadapan umum:

Setelah [ditangkap], saya langsung dijadikan TBO dan pindah ke pos Zipur [Zeni Tempur]. Di sana kira-kira lewat dua hari saya bersama mereka, baru saya mulai melihat kemaluan dan telinga yang digantung di salah satu pohon cemara di pos mereka. Saya dengan mereka melakukan jaga malam di pos. Mereka bergantian di pos supaya boleh tidur, cuma saya tak boleh tidur. Saya harus menyanyi, berteriak-teriak sampai pagi. Kira-kira satu minggu lebih mereka membawa saya ke pos Koramil. Saya diikat di tiang bendera kira-kira pukul 8 pagi. Setelah itu pakaian saya dibuka sampai saya telanjang bulat, terus mereka kasih celana dalam mereka untuk saya pakai waktu diikat. Setelah itu saya dilepas dari tiang bendera dan disuruh pikul dus kosong, berjalan menuju ke pos Zipur. Di jalan saya disuruh berteriak-teriak pada masyarakat yang ada di situ dengan mengatakan, “Jangan ikut pantat Falintil! Kalau ikut Falintil, kalian akan sama seperti saya!” Setelah sampai di pos Zipur, mereka ambil foto saya. Saya minta pakaian sebelum difoto, tapi mereka tidak kasih. Setelah sampai sore baru mereka kasih pakaian.²⁴¹

297. Pada 1983, ratusan lelaki dari desa-desa di sekitar Lospalos bergabung dengan Falintil di hutan. Karena pelarian besar-besaran ini, istri para laki-laki yang meninggalkan desa itu dipaksa tidur di pos militer setiap malam selama satu tahun. PK dari Porlamanu, Mehara (Lospalos, Lautém) ditanyai oleh para tentara dari

Linud 100 dan Yonif 641 karena suaminya juga melarikan diri untuk bergabung dengan gerilyawan. PK menyampaikan kepada Komisi:

Mereka mengikat tangan saya rapat dengan pinggang saya, kemudian mereka menaruh uang di atas meja dan berkata, "Jika kamu memberitahukan nama-nama komandan dalam klandestin, kamu boleh ambil uang ini." Saya jawab, "Saya tidak tahu, yang saya tahu cuma suami saya." Setelah itu mereka mengikat leher saya rapat dengan dinding, kemudian mereka menelanjangi saya. Setelah itu mereka menyundut seluruh badan saya dengan puntung rokok. Terus mereka menyuruh saya menghitung bulu alat kelamin saya. Kemudian mereka mengambil gambar saya sewaktu saya telanjang.²⁴²

298. Dengan berpura-pura perlu pergi ke kakus, PK berhasil melarikan diri dari orang-orang yang menangkapnya dan meminta bantuan kepada Yonif 623. Ia dilepaskan pada malam itu juga.

299. QK1 menyampaikan tentang interogasi terhadap dua temannya. Kedua temannya itu ditelanjangi dan disuruh berdiri di atas satu kaki dengan kedua lengan direntangkan ke atas kepala untuk diambil foto mereka:

Pada 1994...sejumlah Nanggala...menelanjangi dua orang teman saya, QK dan RK, dan menyuruh mereka duduk di atas sebuah meja, kemudian menyetrum alat kelamin mereka...Keesokan harinya, mereka mulai memukuli kami lagi dan menyuruh kami telanjang sampai hanya memakai celana dalam. Kami berdiri di atas satu kaki dengan tangan diangkat ke atas, kemudian mereka mengambil foto kami. Setelah difoto, kami diperbolehkan berpakaian lagi.²⁴³

300. SK memberikan kesaksian lebih lanjut yang menguatkan mengenai praktik tentara mengambil foto para tahanan:

Pada 1996, saya menerima surat yang isinya mengatakan bahwa saya harus menjemput seorang wartawan di Baraut agar bisa bekerja sama. Saya berangkat ke sana dan kami bertemu di sana. Saya membawa semua dokumen [saya] dan berikan kepada wartawan itu. Karena di sana tempatnya tidak memungkinkan untuk kami berbicara lebih banyak, maka kami berdua memutuskan untuk kembali ke Becora [Cristo Rei/Dili Oriental, Dili]...Saya naik taksi...ke Fatuhada [Dom Aleixo/Dili Occidental, Dili]. Setelah saya naik mobil itu, ternyata ada satu buah taksi yang bermerek Argo yang mengikuti saya dari belakang. Di dalam taksi Argo itu ada empat laki-laki yang berbadan gemuk, memakai kacamata gelap dan jaket hitam...Jantung saya mulai berdebar.

Setelah sampai di jalan masuk Delta [satu tempat di Dili] sekitar pukul lima sore, ada dua orang laki-laki yang naik taksi dengan

saya. Mereka juga memakai jaket hitam, berkacamata hitam, dan menggunakan topeng “ninja.” Saya mulai takut. Di dalam taksi itu mereka berdua mulai tekan kedua kaki saya sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mulai mengikat saya, termasuk mata saya diikat dengan kain, serta melepaskan semua pakaian saya, sampai saya tanpa sehelai benang pun [yang menutupi tubuh]. Kemudian mereka membawa saya ke sebuah rumah di sekitar Taci Tolu. Sebelum saya diperkosa, mereka menyundut seluruh tubuh saya dengan sebatang rokok dan membius saya dengan obat. Mereka menggunakan sputangan yang mungkin sudah ditetesi obat bius dan membungkam mulut dan hidung saya sehingga pada saat saya diperkosa saya tidak sadar diri. Saya tidak tahu pasti jumlah mereka berapa orang, tapi yang jelas mereka lebih daripada lima orang. Setelah saya diperkosa, mereka membawa dan membuang saya di sekitar Kasait [Liquiçá], dekat pantai. Setelah sadar baru saya melihat bahwa saya dalam keadaan telanjang. Badan saya penuh dengan darah dan seluruh tubuh saya terluka, termasuk payudara...Setelah beberapa bulan, seorang [anggota] SGI yang berasal dari Ambon memberitahukan kepada Julio, orang Ambon yang bekerja di kantor Kejaksaan, bahwa dia melihat foto saya dalam keadaan telanjang. Julio menyampaikan informasi itu kepada saya.

Pada 20 Mei 2002, saat hari kemerdekaan Timor-Leste, saya melihat foto saya yang dalam keadaan telanjang di pameran. Saya sendiri mengenal bentuk tubuh saya dan saya mempunyai sebuah tahi lalat di dada, sehingga memudahkan saya untuk mengenali [diri saya dalam] foto itu.²⁴⁴

Penghinaan seksual di depan umum

301. Penelanjangan di depan publik merupakan suatu bentuk perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat yang secara efektif digunakan oleh kekuatan pendudukan untuk menundukkan para tahanan maupun masyarakat umum yang dipaksa menyaksikan kejadian-kejadian ini. Setelah terjadinya penangkapan massal sebagai tanggapan terhadap pemberontakan Mau Chiga pada 1982, tiga orang perempuan ditahan di Koramil di Lesuati (Turiscai, Manufahi). Pada suatu malam mereka dibawa keluar, ditelanjangi, dan dipaksa memanjat sebatang pohon cemara. Seperti disampaikan oleh DH kepada Komisi:

Rumah kami di Hatuquero dibakar dan TNI [ABRI] memaksa kami berlari ke Koramil Lesuati. Di sana saya bertemu EH dan FH. Pada malam itu ABRI membawa kami bertiga ke Mantutu. Saya dan kedua teman disuruh melepaskan semua pakaian telanjang bulat, baru dipaksakan memanjat pohon cemara yang sangat tinggi dan besar. ABRI menyuruh kami untuk naik turun pohon itu beberapa kali sambil membakar seluruh tubuh kami dengan kayu yang telah

dibakar dengan api. Kami juga disiram dengan air dingin yang telah disiapkan oleh ABRI dalam sebuah ember. Para ABRI juga pakai senter menyinari alat kelamin kami dari bawah sambil tertawa ketika kami memanjat pohon. FH tidak bisa memanjat pohon karena tidak bisa menahan sakit akibat dibakar karena kulit tubuhnya terkupas, artinya dia naik-turun, naik-turun karena tidak bisa memanjat pohon itu. Tetapi TNI [ABRI] memaksanya untuk tetap memanjat sampai ke ujung pohon tersebut.²⁴⁵

302. Pada 30 Januari 1983, Yonif 745, di bawah komando seorang lelaki yang dikenal sebagai Pak PS350 [orang Indonesia], menahan TK dari Souro (Lospalos, Lautém) bersama enam laki-laki dan empat perempuan lain saat mereka hendak pulang dari kebun mereka. Saat mereka berjalan ke pos militer, satu dari para laki-laki yang ditangkap itu berhasil melarikan diri, walaupun ABRI melepaskan tembakan ke arahnya. Larinya seorang tahanan itu membuat marah anggota tentara yang kemudian memisahkan tahanan laki-laki dari tahanan perempuan. Para laki-laki dibawa ke tempat lain dan sejak saat itu tidak pernah terlihat lagi. TK mengungkapkan kepada Komisi tentang apa yang terjadi terhadap lima perempuan yang ada di situ:

Kami berlima perempuan dipaksa melepaskan pakaian dan berdiri telanjang saja serta rambut kami dicukur sampai botak. Kemudian pakaian kami dibakar semua di depan kami...

Sesudah itu kami dipaksa berjalan kaki menuju ke asrama [Yonif] 745 di Lospalos. Kami berjalan melewati Desa Home, ABRI memaksa semua penduduk desa Home untuk keluar dari rumah mereka untuk dan melihat kami berjalan telanjang. Dengan terpaksa penduduk desa Home keluar dari rumah mereka dan melihat kami berjalan telanjang di depan mereka. Mereka hanya diam dan ada yang menundukkan kepala ketika kami lewat di depan mereka dan ada yang menangis melihat ABRI memperlakukan kami demikian. Namun mereka hanya diam dan tidak berkata apa-apa sebab mereka juga takut mati. Kami sangat malu waktu itu tetapi kami hanya diam dan menuruti kehendak mereka karena kami takut mati. Kami menginap di asrama 745 satu malam saja.²⁴⁶

303. Keesokan harinya, kepala desa Ventura datang untuk meminta ABRI melepaskan para perempuan itu. Akhirnya, mereka diberi karung untuk dipakai menutupi tubuh mereka yang telanjang dan diperbolehkan pergi ke rumah kepala desa. Salah satu dari para perempuan itu, UK, mengungkapkan kepada Komisi bahwa dirinya diperkosa selama menginap satu malam di asrama Yonif 745:

Pada malam kami menginap di asrama 745 Lospalos, saya diperkosa oleh ABRI di depan teman empat orang. Saya sangat malu dan terpukul sebab saat itu saya sangat tertekan mengingat nasib suami saya...yang ditangkap bersama kami di Souro. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah dibunuh oleh ABRI. Saya merasa telah berkhianat terhadap suami saya. Semua teman saya tahu bahwa malam itu saya diperkosa, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela saya sebab kehidupan kami waktu itu ada di tangan ABRI.²⁴⁷

304. Satu tahun kemudian (1984), juga di Desa Souro (Lospalos, Lautém), WK dan anggota-anggota keluarganya ditahan oleh para prajurit dari BTT 315 karena dicurigai terlibat dalam kegiatan klandestin. Mereka dibawa ke pos BTT 315 di Karalata, Souro (Lospalos, Lautém) di mana mereka ditahan dan diinterogasi selama satu minggu. Pada suatu hari, WK dan XK ditelanjangi dari pinggang ke atas dan dipaksa berdiri di bawah terik matahari sepanjang hari.²⁴⁸

305. Di Mehara (Tutuala, Lautém), pada 1985 YK ditangkap oleh seorang anggota pasukan Wanra bernama PS351 atas perintah dari seorang komandan setempat yang dikenal sebagai PS392 [orang Indonesia]. PS351 membawa YK ke sebuah tangki air, menyiramnya dengan air dan melakukan pelecehan terhadapnya. Kemudian ia membawa YK ke pos komando,¹ di mana ia bersama para tahanan lain di sana dipukuli. Setelah memukulinya, mereka menemukannya di dalam satu sel penahanan bersama dua perempuan lainnya yang bernama Q dan R. Mereka menelanjangi ketiga perempuan ini, dan kemudian memasukkan mereka ke dalam sebuah tangki air sepanjang malam. YK menyampaikan kepada Komisi tentang penghinaan seksual di depan umum yang kemudian dialaminya:

...Saya dimasukkan dalam sel tahanan di pos komando bersama dengan dua orang, Q dan R. Kemudian kami bertiga dimasukkan dalam genangan air yang berlumut dan pagi harinya pakaian kami diberikan untuk kami pakai...Kemudian keesokan harinya saya dikeluarkan dari sel tanpa pakaian dan hanya memakai celana olahraga. Di hadapan banyak orang, seorang [anggota] Tim Alfa,¹ PS352, menyobek celana tersebut dan mengatakan kepada teman-temannya, "Siapa yang ingin bersetubuh dengan YK?" Tetapi tidak seorangpun yang datang untuk melakukannya.²⁴⁹

* Pernyataan asli hanya menyebutkan pos komando. Ini bisa pos Hansip atau pos kelompok milisi Tim Alfa.

¹ "Tim Alfa dibentuk oleh Kopassus pada pertengahan dasawarsa 1980-an, untuk menyusup ke dalam gerakan klandestin dan membantu dalam operasi-operasi pertempuran. Hubungan kelembagaan ini tetap ada pada 1999." [Geoffrey Robinson, East Timor 1999 – Crimes Against Humanity, Laporan yang disusun atas permintaan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Juli 2003, Submisi kepada CAVR, April 2004, halaman 165.]

306. Kemudian pakaiannya diberikan kepadanya dan ia dibawa kembali ke pos. Tiga hari kemudian ia dilepaskan.

307. Penghinaan seksual tidak selalu terjadi di depan umum. Pada 26 April 1999, AL ditangkap di rumahnya di Desa Purogoa (Cailaco, Bobonaro) oleh anggota-anggota milisi Halilintar, termasuk seorang bernama PS410 dan seorang polisi. AL mengungkapkan kepada Komisi:

Pada 26 April 1999 PS410 dan anggota-anggota Halilintar, dan polisi mengambil saya dari rumah saya sekitar pukul 10 [pagi hari]. Saya tidak tahu nama mereka, yang saya tahu cuma PS410 dan PS353. Mereka menyeret saya ke jalan dan memukuli saya dengan batang ubi kayu...Guntur dan PS353...mengambil bendera merah-putih dan mengikatkan ke kepala saya, sampai di aldeia Biadoi, Meligo [Cailaco, Bobonaro] bendera itu baru dilepaskan. Kemudian kami didorong masuk ke sebuah mobil. Ketika kami sampai di kantor PS410 di Cailaco Kota, PS353 menendang saya. PS410 melepas pakaian saya hingga yang tersisa celana dalam dan kutang. Setelah itu sekitar pukul 12.00 PS410 menyuruh saya menandatangani sepucuk surat yang menyatakan tidak akan terlibat dalam organisasi gelap. Kemudian, saya dipulangkan ke rumah.²⁵⁰

Pelecehan seksual

308. Pelecehan seksual umumnya didefinisikan sebagai perhatian seksual yang tanpa diminta yang terjadi dalam konteks suatu hubungan kuasa yang tidak setara. Pelecehan seksual dianggap terjadi ketika orang yang memiliki kuasa dominan menggunakan keunggulan ini untuk melakukan pendekatan seksual tanpa diundang, baik itu secara lisan ataupun secara fisik, terhadap orang yang kurang berdaya. Sebagaimana telah terlihat di atas, dalam konteks konflik bersenjata di Timor-Leste, para laki-laki yang bersenjata atau yang berkuasa menggunakan kekuasaan mereka atas penduduk sipil untuk terlibat dalam segala bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual.⁷

309. Pada 26 Maret 1996, rumah BL di Desa Lisabat (Hatolia, Ermera) digerebek oleh Tim Rajawali 401. Ia dan suaminya menyembunyikan seorang asisten komandan Falintil yang bernama BL2, yang kemudian tertangkap. Tentara mengikat suaminya, BL1, dan BL2 dengan tali, memukuli dan menendangi mereka, sambil memaksa mereka berparade di sekitar rumah. Mereka memukul BL dengan sepucuk senjata, menelanjinginya, dan menganiayanya. Mereka juga menelanjangi ibu mertua BL, CL, dan menginterogasinya:

[Tim Rajawali 401] masuk ke dapur...Memegang erat tangan saya, meminta informasi bahwa saya yang menyembunyikan dan memberi makan orang-orang di hutan [anggota Falintil]. Mereka menendang

* Pelecehan seksual sering dibahas dalam konteks hubungan pegawai-majikan atau murid-guru.

dan menyeret saya, dan memukul kepala saya dari atas dengan senapan. Setelah itu [seorang anggota] Rajawali memeluk saya untuk memegang buah dada saya...Kemudian anggota-anggota Rajawali itu mulai melucuti pakaian saya dan meraba-raba tubuh saya dengan mengatakan bahwa saya menyembunyikan pistol...Setelah itu Rajawali memegang mertua saya dan menelanjinginya untuk dilakukan pemeriksaan. Sebagian anggota Rajawali terus memukul suami saya sampai ia babak belur. Saya tetap dibiarkan berdiri dalam keadaan telanjang seperti boneka.²⁵¹

310. Banyak perempuan menderita perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat melalui pelecehan seksual yang mereka alami di “pesta-pesta dansa” pada 1999. Pada puncak kegiatan milisi tahun 1999, kelompok-kelompok milisi di seluruh Timor-Leste menyelenggarakan pesta-pesta dansa, yang orang-orang perempuan dari desa-desa sekitar dipaksa untuk menghadirinya. Salah satu pesta seperti itu berlangsung di Desa Lourba (Bobonaro, Bobonaro). DL memaparkan peristiwa ini:

Pada 4 Mei 1999, milisi DMP [Dadurus Merah Putih] mengadakan operasi di desa kami...Mereka memaksa kami untuk menyembelih sapi, babi, kambing, dan ayam, baru diberikan kepada mereka. Yang menjadi komandan saat itu adalah PS354 dan PS355. Anggota mereka berjumlah sekitar 300 orang. Pada siang hari itu, kami harus memasak untuk para milisi tersebut. Pada malam hari kami harus melayani mereka, seperti menemani mereka dan berdansa dengan mereka...

Dalam acara dansa itu mereka mulai macam-macam seperti memasukkan jari ke bagian tubuh yang sensitif dan seluruh badan [saya] diraba-raba seolah-olah saya telah jadi istri mereka. Tetapi saya harus bilang apa? Kalau saya menolak, itu berarti nyawa saya akan melayang. Waktu itu saya bersama dengan teman-teman [tiga perempuan].²⁵²

311. Milisi menggunakan pelecehan seksual, sebagaimana mereka melakukan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, dalam kegiatan teror mereka untuk menimbulkan ketakutan di kalangan penduduk umumnya. Komisi menerima pernyataan-pernyataan dari para perempuan yang diambil paksa oleh kelompok-kelompok milisi, sering di waktu malam, dan dijadikan sasaran pelecehan seksual.

312. Di tengah malam, pada suatu hari sebelum Jajak Pendapat 1999, EL dan S diambil paksa dari rumah mereka di Desa Lacro (Atsabe, Ermera) oleh lima orang milisi dari Timor Pancasila atas perintah dari kepala desa, PS356. Ketika sampai di rumah kepala desa, mereka dipaksa berdansa dengan petugas-petugas dari Satuan Gabungan Intelijen (SGI) sampai pagi. Karena takut akan keselamatan nyawanya, EL dan S berdansa dengan para laki-laki ini, yang meraba-raba payudara dan mengganggu mereka secara seksual saat berdansa. Pada September 1999, kedua perempuan ini

kembali ditahan oleh para anggota kelompok milisi yang sama, dan kembali dibawa ke rumah kepala desa itu. Kali ini mereka dibenamkan ke dalam sebuah tangki air yang telah diisi seekor ular hitam yang kemudian menggigit mereka.²⁵³

313. Pada 7 Mei 1999, milisi Mahidi menyerang rumah FL di Subdistrik Zumalai (Covalima), untuk mencari suaminya yang telah lari ke hutan. FL mengisahkan kepada Komisi:

Pada 7-9 Mei 1999, para pelaku datang mengepung rumah kami, mereka mengeledah seluruh isi rumah untuk mencari bendera Fretilin, dokumen-dokumen, dan juga suami saya. Karena tidak berhasil, maka sasaran mereka adalah saya dan anak laki-laki yang berumur satu tahun. Para pelaku melemparkan anak laki-laki saya ke dalam mobil, sedangkan saya dipukul di bagian kepala dan dicacimaki lalu [mereka] melemparkan saya ke dalam mobil. Sambil mengatakan, "Kita berolah raga dulu" mereka memukul saya. Mereka membawa kami ke pos Mahidi dan [kami] dimasukkan ke dalam sel. Kami diinterogasi oleh istri kepala desa PS360 [orang Timor-Leste]. Karena saya tidak menjawab pertanyaannya, saya dipukul. Setelah selesai dipukul, mereka memberi [kami] makanan, yaitu nasi tanpa sayur. Setelah makan saya dipukul lagi dan dipaksa minum air kencing entah air kencing siapa. Saya di sel dengan empat perempuan lain, Lucilia, Domingas, Monica, dan Lucia. Selnya di rumah polisi yang bernama PS358 [orang Timor-Leste].

Setelah itu datang milisi perempuan bernama PS359 ke sel saya dan dia yang membakar mulut saya dengan rokok sambil mengancam, "Kalau suaminya tidak ada lebih baik bunuh saja istrinya." PS357 menanyakan kepada saya, "Di mana kalian sembunyikan bendera Fretilin?" Saya tetap tidak menjawab pertanyaannya, lalu pelaku ke luar dari sel langsung menyuruh lima orang milisi untuk masuk ke dalam sel sambil mengatakan, "Mainkan dia, ini gratis." Tetapi mereka tidak sampai berbuat apa-apa dengan saya. Di antara kelima milisi tersebut hanya milisi PS361 yang mencoba memerkosa saya tetapi saya menolak dan mengatakan, "Lebih baik kalian membunuh saya." Kemudian datang lagi Danki [Komandan Kompi] TNI 743, dia menyatakan, "Kita berdua pacaran saja. Kamu kan sering baku cium dengan Falintil." Mendengar jawaban saya sangat kasar, maka dia memukul mulut saya sampai bengkak. Kami dilepas setelah membuat surat pernyataan untuk tetap berada di bawah Mahidi dan Merah Putih, atas perintah PS357.²⁵⁴

314. GL, bersama dengan dua perempuan lainnya, diambil dari desanya di Cová (Balibó, Bobonaro), oleh milisi Firmi (Fiar Metin Merah Putih, Yakin pada Merah Putih) dan dibawa ke pos mereka. Dengan alasan untuk memeriksa payudara mereka untuk mencari benda "sihir" yang ditanamkan di dalamnya, para anggota milisi itu menelanjangi mereka.

Pada 7 Mei 1999 pagi...milisi Firmi komandan PS363 menangkap saya bersama HL dan IL di Railulu, Desa Cova, Bobonaro. Kami bertiga dibawa ke pos milisi Firmi di Balibó untuk diinterogasi. Kemudian kami dimasukkan ke satu kamar. Mereka menyuruh kami melepaskan pakaian kami untuk melihat jimat macam apa yang telah kami tanamkan di payudara kami. Karena mereka tidak menemukan apa-apa, setelah pemeriksaan itu kami disuruh pulang ke rumah.²⁵⁵

Dampak kekerasan seksual terhadap korban

315. Konflik selama 25 tahun telah meninggalkan dampak yang mendalam bagi para korbannya, apapun gender dan berapapun usianya. Semua keluarga di Timor-Leste tidak luput dari pengalaman kekerasan. Namun, walaupun laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi korban konflik, penting untuk menyebutkan perbedaan pengalaman korban laki-laki dan korban perempuan pelanggaran hak asasi manusia. Ada tiga segi yang membedakan pengalaman korban perempuan dengan korban laki-laki:

- perempuan adalah korban utama dari kekerasan seksual, mereka menanggung konsekuensi sosial-budaya, kejiwaan, dan jasmani yang khusus dari kekerasan seksual;
- perempuan yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia nonseksual menghadapi hambatan yang berbeda dalam pemulihannya, karena fungsi reproduksi yang berbeda, serta peran dan status berbeda yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan; dan
- perempuan sebagai pemelihara utama rumahtangga juga menderita ketika anggota keluarga laki-laki mengalami pelanggaran berat hak asasi manusia karena harus mengambil alih semua tanggung jawab memberikan perlindungan, penghidupan, serta merawat anak dan tanggungan lainnya ketika pasangannya tidak ada.

316. Selama masa konflik di Timor-Leste, kekerasan seksual memiliki dampak yang mendalam pada para korban dan masyarakat umum. Walaupun sebagian besar kekerasan seksual berlangsung tersembunyi, berita tentang kejadian seperti ini dapat dengan sangat cepat diketahui masyarakat. Bahkan lama sesudah kejadiannya, kekerasan seksual terus berpengaruh pada kehidupan para korbannya dalam hal kesehatan fisik dan mental serta status sosial mereka.

Kesehatan reproduksi

317. Selama pembalasan ABRI terhadap penduduk Mau Chiga (Hato Builico, Ainaro) setelah terjadinya serangan Falintil yang gagal pada 1982, IH adalah salah satu dari banyak perempuan Mau Chiga yang mengalami kekerasan seksual. IH adalah seorang remaja korban dari pemerkosaan berulang di pos militer Mantutu di dekat Lesuati sebelum ia dipindahkan ke Dare dan kemudian ke Nunumogue. Ia sering “dikejar” oleh prajurit-prajurit tentara Indonesia. Seorang anggota Hansip mengikutinya sepanjang jalan ke Nunumogue dan memerkosanya di sana.²⁵⁶

Setiap malam saya dibuntuti oleh [anggota-anggota] ABRI dan Hansip. Saat itu saya berumur 12 tahun. Sebelum saya diperkosa, saya disiksa dengan berbagai macam cara. Saya dipukul dengan senapan, disundut, disiram dengan air, dan ditelanjangi. Mereka membawa saya keluar ke tengah alang-alang, sehingga terjadilah apa yang tidak disangka oleh saya. Pada malam pertama, saya diperkosa oleh PS364 [orang Timor-Leste] tentara [Batalion] 744, pangkat kopral. Pada malam kedua saya diperkosa oleh PS365 [orang Timor-Leste], tentara 744, pangkat kopral. Pada malam ketiga, saya dipaksa oleh PS366 [orang Timor-Leste] dari tentara 744, pangkat kopral. Setelah kejadian itu tubuh saya penuh dengan darah, dan itu merupakan hal baru bagi saya... Ada seorang Hansip yang belum puas. Ia tetap mengikuti saya ke Nunumogue [Hato Builico, Ainaro]. Ia membawa saya pada malam hari dan melakukan hal itu di luar rumah. Sebelumnya ia menggunakan senjata untuk pukul kepala saya. Setelah semua kejadian itu baru saya mulai merasa sakit di bagian alat kelamin, gatal-gatal dan susah kencing, [sakit] di pinggang dan di perut.²⁵⁷

318. Selama periode konflik, perempuan sulit mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Walaupun ada Puskesmas, pelayanan kesehatan Indonesia lebih mengutamakan pelayanan kesehatan primer dan ibu hamil serta mengejar target keluarga berencana. Mereka mengabaikan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.²⁵⁸ Kebutuhan-kebutuhan khusus yang menyangkut kesehatan reproduksi, seperti tes untuk penyakit menular melalui hubungan seksual, dan deteksi dini kanker atau sel pra-kanker dalam sistem reproduksi, tidak tersedia bagi perempuan. Perempuan yang telah mengalami pemerkosaan tidak tahu ke mana harus mencari pelayanan kesehatan formal.

319. Dalam banyak kasus, anggota keluarga yang memberikan pengobatan kepada mereka dengan obat-obatan tradisional.

Pada saat ia [sepupu saya] turun dari motor ia tidak bisa berjalan karena ia telah diperkosa. Ia tiba dalam keadaan banyak luka dan darah di kemaluan. Saya sendiri mengobati... dengan [ramuan] daun sirih yang dicelup dalam air panas. Ia minum air sirih dan saya mandikan dengan air sirih dan daun sirih yang telah direbus ditempel di kemaluannya.²⁵⁹

320. Jika tidak ditangani, penyakit menular melalui hubungan seksual dapat mengakibatkan kematian yang relatif cepat akibat infeksi panggul yang parah atau masalah kesehatan reproduksi jangka panjang, termasuk kanker. Dalam sejumlah pernyataan yang diperoleh Komisi, orang-orang yang telah mengalami pemerkosaan atau anggota keluarga mereka berbicara mengenai suatu “penyakit perempuan” yang tidak jelas.

Ia dibawa ke pos tentara dan diperkosa bergiliran. [Pemeriksaan ini] berlangsung sampai mereka [Linud 100] pulang pada 1980 dan digantikan oleh Batalion 643...Mereka juga memaksa saya menjadi TBO di pos itu...Saya sendiri melihat...mereka memerkosa saudara perempuan saya itu. Ketika mereka meninggalkan Fahinehan [Fatuberliu, Manufahi] mereka menyuruh saudara perempuan saya itu pulang...Setelah lama menjadi korban kekerasan seksual, ia mengalami sakit kandungan sampai akhirnya meninggal tahun 1994.²⁶⁰

321. Perempuan yang mengalami pemerkosaan berulang-ulang dan penyiksaan berat menderita masalah kesehatan yang berganda: reproduksi, mental, dan fisik. Kenyataan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut tidak ditindak, dan dapat berulang kapan saja, menambah beban mental bagi orang-orang yang mengalaminya:

Kami ditahan selama 16 hari di tempat tahanan tersebut dan selama itu juga setiap malam saya dan ketiga teman saya selalu diperkosa empat orang...Pada saat mereka sudah lelah dari memerkosa kami, mereka akan menyuruh teman laki-laki yang ditahan bersama kami waktu di tahanan untuk memerkosa lagi saya dan teman-teman saya...Setelah itu saya disiksa. Mereka memukul saya dengan sebatang kayu yang ukurannya sangat besar; mereka memukul di bagian pinggul saya dan kepala saya. Akibatnya pinggul saya menjadi patah dan saya selalu merasa sakit di kepala dan saya tidak bisa berjalan...Setelah 16 hari ditahan, mereka melepaskan saya dan ketiga teman saya. Karena saya tidak bisa berjalan, mereka dari Koramil mengantar saya sampai ke rumah saya di Uatolari [Viqueque]. Setelah di rumah, pinggul saya diobati dengan obat tradisional oleh keluarga saya tapi tidak terlalu membantu. Yang mengurangi rasa sakit pinggul itu hanya kompres es batu. Tetapi saya masih trauma karena kejadian yang menimpa diri saya. Saya merasa bahwa ada orang yang selalu memata-matai saya, mau menangkap saya, [saya] selalu merasa ketakutan. Akhirnya saya melarikan diri ke Dili.

[Akhirnya] saya menikah. Dari perkawinan itu kami mendapatkan seorang anak laki-laki. Setelah saya melahirkan, saya mulai merasakan pinggul saya sakit, akibatnya saya tidak bisa berjalan, hanya tidur saja. Selama tiga tahun saya hanya di atas tempat tidur, tetapi sekarang sudah bisa berjalan. Saya merasa banyak sekali yang ingin saya ceritakan, tetapi saya lupa, mungkin akibat dari siksaan yang saya terima waktu saya ditahan.²⁶¹

322. Perempuan hamil menjadi sasaran kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Ini berdampak buruk bagi kesehatan kandungan mereka dan keselamatan janin.

Istri saya dan adik perempuannya...ditangkap dan kemudian diperkosa selama enam jam, dari pagi sampai pukul 4 sore. [Istri saya] hamil enam bulan saat itu. Pada sore hari mereka berdua berhasil melarikan diri. Tentara Indonesia berhasil menembak mereka. JL mati tertembak, dan istri saya tertembak pinggulnya. Ia berhasil lari ke tempat tinggal saya...Ia mengalami keguguran dan tidak lama kemudian ia meninggal.²⁶²

Aborsi yang tidak aman

323. Bagi sebagian korban yang menjadi hamil akibat pemerkosaan yang dialaminya, rasa malu, bersalah, dan marah mendorong mereka mengambil tindakan putus asa menggugurkan kandungan. Dalam beberapa kasus, aborsi yang tidak aman berakibat fatal:

Setelah pulang dari Ataúro, kami selalu diawasi oleh intel ABRI sehingga kehidupan kami tetap tidak aman. Dan lebih terpuuk lagi ketika kami pulang, saya mendengar berita bahwa kakak saya, KL, sudah meninggal. Dia dihamili oleh ABRI waktu ditahan di Korem Dili. Ketika dia mendengar suaminya sudah mau kembali lagi ke Laleia [Manatuto], dia langsung menggugurkan kandungannya karena dia takut dianggap istri yang tidak setia pada suaminya. Pengguguran itu yang menyebabkan dia meninggal.²⁶³

324. Dalam satu kasus, seorang korban perbudakan seksual dalam rumahtangga meninggal akibat penyakit yang kemungkinan berhubungan dengan upaya untuk menggugurkan kandungannya oleh tentara yang memerkosanya:

Pada Maret 1979...adik saya yang bernama T...diambil oleh [seorang anggota] Hansip yang bernama PS367 untuk dibawa ke komando di Leohat [Soibada, Manatuto], atas perintah komandan Hansip yang bernama PS368 yang sering memukul masyarakat...Menurut informasi adik saya T, sampai di komando dia langsung diperkosa oleh [seorang anggota] Nanggala yang bernama PS369 [orang Indonesia]. T dipaksa menjadi istri PS369 selama enam bulan. Saat Nanggala PS369 mengetahui T dalam keadaan hamil, PS369 mencoba menggugurkan bayi dalam kandungannya dengan cara mengurut perut T dengan Rheumason [sejenis balsam yang panas] terus-menerus. Ketika ia mulai sakit berat, PS369 membawa T ke rumah paman saya...pada 6 September 1979...Sesudah empat hari kemudian baru saya dibawa ke hutan oleh komandan [Batalion] 122 sebagai TBO selama satu bulan. Kembalinya dari hutan, adik saya T

sudah meninggal...Menurut paman saya, adik saya di rumah hanya bertahan selama enam hari...²⁶⁴

325. Komisi juga menerima bukti mengenai kasus-kasus yang pelakunya berusaha memaksa korban menghentikan kehamilan. Dalam beberapa kasus perempuan dibawa ke klinik kesehatan setempat dan diberi suntikan yang dipercaya dapat menggugurkan kandungan:

Di Betun, Timor Barat saya bertemu lagi dengan pelaku, dan ia mengajak lagi saya untuk melayani, saya minta maaf dan mengatakan bahwa saya lagi tidak haid [disebabkan pemerkosaan oleh pelaku yang sama], maka pelaku pun kaget dan mengajak saya ke Puskesmas Betun untuk disuntik. Setelah tiga hari kemudian pelaku datang dan bertanya kepada saya, “Bagaimana dengan suntikan itu? Apakah sudah haid kembali?” Maka saya menjawab tidak. Maka hari itu juga, dia menghindar dari saya, dan tidak pernah kembali lagi.²⁶⁵

326. Aborsi yang tidak aman dapat mengakibatkan kematian ibu, sakit dalam jangka panjang, atau cacat pada ibu. Aborsi juga dapat berdampak pada kesehatan bayi yang selamat dari upaya penghentian kandungan ini.

Kesehatan mental

Tidak seorangpun yang peduli, saya sendirian. Setelah itu [diperkosa], bahu saya sakit, [saya] banyak berpikir sehingga stres atau gila. Karena aktif dalam kegiatan klandestin, saya tidak bisa merawat anak...dia meninggal pada...Agustus 1999 setelah pengibaran bendera Falintil... Kekerasan yang terjadi pada saya menyebabkan saya menderita “sakit perempuan”—serangan darah putih yang membuat saya tidak bisa berpikir dengan baik, dan akhirnya berpisah dengan suami. Sekarang saya tinggal sendirian dengan empat anak saya.²⁶⁶

327. Bagi sejumlah perempuan yang mengalami tekanan atau trauma dari kekerasan seksual, tidak adanya jaminan keamanan, tidak adanya pelayanan kesehatan mental untuk menangani trauma, dan perasaan marah, malu, pengucilan, dan rasa bersalah berakibat pada berkembangnya penyakit mental jangka panjang. Sebagian orang, yang anggota keluarganya memberi dukungan dan perawatan, bisa mengatasi trauma tanpa akibat jangka panjang yang berat (lihat Bagian 10: *Acolhimento* dan dukungan pada korban).

328. Perempuan-perempuan lain yang mengalami kekerasan seksual berat tidak mampu pulih dari trauma, walaupun mendapatkan dukungan dari keluarga mereka.

Tentara, orang Indonesia dan orang Timor, setiap dua orang bergantian memerkosa saya dan adik perempuan saya. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak, orang banyak...Begitulah terus

*selama empat hari...Sampai sekarang U menderita akibat perlakuan mereka. Pikirannya kacau, sering pingsan...sampai sekarang ia tidak menikah karena terus-menerus sakit.*²⁶⁷

329. Komisi berkali-kali mendapatkan kesaksian mengenai konsekuensi kesehatan mental jangka panjang dari pemerkosaan:

*Selama satu bulan tentara Batalion 122 dari Sumatra menguasai wilayah itu, banyak perempuan menjadi korban pemerkosaan. Mereka mendatangi rumah penduduk, mengambil barang milik orang, ayam, telur ayam, dan kemudian memaksa anak perempuan dan perempuan bersuami untuk memenuhi keinginan seksual mereka. Sampai sekarang seorang perempuan mengalami depresi mental dan akhirnya menjadi gila karena beberapa orang tentara ini memerkosanya secara berurutan.*²⁶⁸

330. Pada periode-periode peningkatan kekerasan, mereka yang sudah mengatasi sakit mental akibat kekerasan masa lalu dapat menjadi rentan kembali terhadap trauma yang kembali muncul.

331. Pada 1999, Fokupers* melaporkan satu kasus seorang perempuan korban perbudakan seksual di Viqueque. Seorang perempuan yang pada masa Portugis bekerja sebagai guru ini berkali-kali dijadikan “istri,” sedikitnya oleh lima orang anggota tentara secara berurutan. Ketika staf Fokupers pertama kali mendengar tentang kasus ini, Dina, demikian namanya disebut dalam laporan untuk melindungi identitasnya, menderita sakit jiwa. Tanpa perawatan kesehatan jiwa untuk menyembuhkannya, Dina berjalan telanjang keliling desa, sampai akhirnya karena putus asa, orangtuanya merantainya di tempat tidur.²⁶⁹

332. Akses pada pelayanan kesehatan mental dalam masa 25 tahun konflik sangat terbatas dan sampai sekarang masih menjadi masalah bagi para korban kekerasan seksual (lihat Bab 10: *Acolhimento* dan dukungan pada korban; juga Bagian 11: Rekomendasi).

Lingkaran pengorbanan

333. Para perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual sering berada dalam suatu lingkaran pengorbanan. Sebagian besar korban kekerasan seksual juga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia lainnya, seperti penahanan ilegal atau pemindahan paksa. Dalam banyak kasus, kejadian kekerasan seksual membawa pelanggaran selanjutnya, baik seksual ataupun yang lain, oleh para pelaku. Tragisnya, perempuan yang sudah menderita kekerasan seksual selanjutnya menjadi korban

* Fokupers (Forum Komunikasi Perempuan Timor Lorosae) adalah satu organisasi nonpemerintah perempuan Timor-Leste terkemuka berbasis di Dili. Organisasi ini didirikan pada 1997, dan menyelenggarakan program dukungan psikososial untuk perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Fokupers bekerja erat dengan Komisi dalam sejumlah unsur program dukungan pada korban pelanggaran hak asasi manusia, khususnya perempuan.

komunitasnya, yang karena kesalahpahaman umum, menyalahkan perempuan yang mereka anggap telah melanggar norma seksual yang sangat dijaga ketat itu. Perempuan yang telah menyerap norma ini dalam dirinya juga mempersalahkan dirinya sendiri, walaupun kejahatan itu bukan atas kemauan diri mereka.

Menyalahkan diri sendiri

334. Di Timor-Leste, persepsi sosial mengenai pemerkosaan dan kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh pengertian mengenai kehormatan, sehingga para korban kekerasan seksual sering merasa bersalah karena telah gagal mempertahankan kehormatan diri dan keluarganya, serta dalam beberapa kasus, kehormatan suaminya. Dalam pernyataan berikut ini, seorang korban pemerkosaan mengungkapkan perasaannya bahwa ia telah mengkhianati suaminya dengan “membolehkan” dirinya diperkosa:

Saya sangat malu dan terpuak sebab saat itu saya sangat tertekan mengingat nasib suami saya yang ditangkap bersama kami di Souro [Lospalos, Lautém]. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah dibunuh oleh ABRI. Saya merasa telah berkhianat terhadap suami saya.²⁷⁰

335. Beberapa korban pemerkosaan sampai berpikir untuk bunuh diri:

Saya berada pada situasi yang sulit dan sangat takut bahwa ia akan memerkosa adik perempuan saya. Karena itu, saya mengorbankan diri walaupun saya memberikannya alasan-alasan medis agar ia tidak memerkosa saya. Ia memerkosa saya empat kali. Saya ingin sekali bunuh diri, melarikan diri, tetapi milisi mengawasi saya.²⁷¹

336. Korban yang belum menikah saat terjadi pemerkosaan merasa sangat malu tentang kejadian yang menimpa mereka. Dalam beberapa kasus, ini menjadi hambatan bagi mereka untuk mengembangkan hubungan atau menikah:

[Setelah memerkosa, prajurit Falintil itu] mengancam agar saya tidak menceritakan kepada ibu dan ayah saya. Kalau saya memberi tahu seseorang, suatu malam ia akan datang mengambil saya untuk dibunuh. Sampai sekarang, saya tidak mau menikah, karena ia telah merusak diri saya seperti binatang. Karena itu saya malu untuk menikah. Lebih baik saya diam saja dan kerja di kebun untuk keperluan makan dan minum.²⁷²

Mempersalahkan korban

337. Korban perbudakan seksual mengalami bentuk pengucilan sosial yang paling ekstrem. Pelanggaran yang terjadi dalam waktu yang panjang sering melibatkan bentuk-bentuk pemaksaan yang halus. Pandangan masyarakat tentang perempuan

yang menjadi korban perbudakan seksual, khususnya perbudakan seksual dalam rumah tangga, diwarnai oleh anggapan umum yang tidak membedakan hubungan di luar nikah yang sukarela dengan yang tanpa persetujuan:

Kebanyakan masyarakat [di Liquiçá] memanggil saya “lonte”, mengatakan saya adalah “simpanan” ABRI. Saya katakan bahwa itu bukan karena kemauan saya, tetapi karena perang yang membuat saya jadi demikian...Memang saya nikah dengan mereka sebab kalau tidak mereka akan membunuh kami...Saya memberikan kontribusi [untuk perjuangan kemerdekaan] dengan menyerahkan diri demi tanah air kita, Timor-Leste.²⁷³

338. Tidak hanya para korban, anggota keluarga dekat mereka juga dipermalukan dan dihina:

Para korban sangat menderita waktu itu sebab ada sebagian masyarakat yang selalu mengejek dan mengolok mereka bahwa mereka adalah istri simpanan ABRI. Ada juga yang mengatakan mereka perempuan pelacur dan sebagainya. Menurut masyarakat di lingkungan kami, kawin paksa dengan ABRI merupakan aib keluarga yang tidak perlu diungkit oleh siapapun.²⁷⁴

339. Sikap masyarakat yang keras terhadap perempuan yang menjadi korban perbudakan seksual diketahui oleh semua orang, termasuk anak-anak. Banyak dari mereka yang tidak punya pilihan selain mengikuti kemauan laki-laki bersenjata menjalani perbudakan seksual dengan mengetahui bahwa masyarakat mencela mereka. Ini juga memengaruhi pilihan hidup mereka ketika mereka berhasil melepaskan diri dari situasi yang mereka alami:

Saya bilang saya masih kecil [berusia 13 tahun], saya masih ingin melanjutkan sekolah...Kepala desa bertanya, “Mengapa engkau tidak mau? Kau mau supaya ABRI datang membawa kalian untuk dibunuh? Kamu tidak mau hidup?”...Saya menjawab, “Paman, menikah dengan ABRI baik, tetapi menurut nenek moyang, bagi perempuan yang menjadi istri simpanan ABRI dipanggil ‘puta’ [pelacur]. Saya tidak mau suatu saat masyarakat mengecap saya dengan kata ‘feto puta’...Setelah tiga bulan Dandim diangkat menjadi Bupati Viqueque kemudian mengambil istrinya di Jawa dan dibawa ke Viqueque. Saat itu pula saya tidak dipakai lagi oleh Dandim...Saya tidak lagi bersekolah karena malu dengan teman-teman, karena pada malam kami dijemput dan dibawa ke Kodim kami dilihat oleh teman-teman sekolah saya, sehingga saya sangat malu. Akhirnya saya berhenti sekolah.²⁷⁵

340. Seorang perempuan lain mengingat:

Selama empat bulan saya harus bolak-balik ke pos mereka, baik itu siang maupun malam. Saya sangat malu dengan lingkungan sebab saya sering digosipkan bahwa setiap hari saya melayani para prajurit ABRI di pos.²⁷⁶

341. Dalam beberapa kasus masyarakat terlibat mendukung pengorbanan satu atau beberapa orang perempuan untuk menjadi “istri tentara” agar mendapatkan keselamatan bersama. Walaupun demikian perempuan yang menjadi korban perbudakan seksual ini sering dihina dan dicurigai.

342. Dalam beberapa kasus, anggapan umum yang keliru yang menganggap perbudakan seksual sebagai hubungan di luar nikah yang sukarela menambah penganiayaan dari pihak lain terhadap para korban:

Selama satu bulan kami sekeluarga tinggal di Hakesak [Atambua, Timor Barat]. Setibanya di kamp pengungsian, PS370 [orang Timor-Leste] tetap jadikan saya sebagai istri keduanya. Tetapi tiba-tiba istri pertama PS370 datang ke tempat saya dan mengatakan kata-kata kasar (“perempuan lonte”) di depan saya. Dia juga mengancam akan membunuh saya bila saya tetap berhubungan intim dengan suaminya. Waktu itu, saya dalam keadaan terjepit. PS370 mengancam akan membunuh semua keluarga saya bila saya tidak melayaninya, tetapi di lain pihak istrinya datang ke tempat pengungsian dan mencaci-maki kami semua.²⁷⁷

343. Perbudakan seksual dalam rumahtangga adalah hal yang memalukan bagi keluarga. Perempuan sering dipersalahkan atas malu yang mereka timbulkan pada keluarga, walaupun kenyataannya mereka terpaksa masuk ke dalam situasi itu.

Tetapi ia tetap mendorong sampai pintunya terbuka... Sesudah itu PS371 [Komandan Koramil Laclubar] mulai perkosa saya secara paksa. Dan saat ia memerkosa saya dalam keadaan menangis, karena tubuh saya masih kecil dan umur saya baru 15 tahun. Sesudah PS371 memerkosa, mengatakan kepada saya, “Kamu harus kawin dengan saya.” Setelah PS371 pulang ke Koramil, orangtua saya memukul saya sampai darah keluar. Orangtua mengatakan kepada saya, “Jangan kawin dengan orang militer.” Tetapi PS371 tetap datang ke rumah sampai saya hamil. Sewaktu [saya] bersalin, anak tersebut langsung meninggal. PS371 kawin dengan saya selama lima tahun, mulai 1985-1989. Baru [sesudah itu] dibiarkan saya sebagai janda. Dan ia kembali ke Sumatra, tanpa mengatakan apa-apa kepada saya dan orangtua saya.²⁷⁸

Kehilangan keperawanan, kehilangan kesempatan untuk menikah

344. Norma sosial mengenai nilai keperawanan dalam masyarakat Timor-Leste, khususnya di daerah perdesaan, membuat sebagian perempuan yang telah mengalami pemerkosaan menemui kesulitan untuk menikah. Sekali lagi, tidak adanya pembedaan antara hubungan seksual yang sukarela dengan yang tidak semakin mengorbankan korban pemerkosaan itu.

Kemudian [setelah diperkosa oleh anggota tentara] saya keluar dari rumah dengan menangis. Kakak perempuan saya bilang, “Ya sudahlah, perang memang begitu.”...Kakak saya membawa saya ke Koramil Letefoho dan [selanjutnya] ke Ermera untuk mendapatkan perawatan, karena [saya] luka akibat pelanggaran seksual...Sampai sekarang saya tidak menikah. Saya hidup dengan ayah saya saja...²⁷⁹

345. Namun, Komisi juga mendapatkan kesaksian-kesaksian dari para korban pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dapat menemukan kebahagiaan menikah dan berumah tangga, walaupun telah mengalami kejadian itu di masa lalu.

Bertahan hidup dan diskriminasi terhadap anak-anak

346. Perempuan yang hamil dan melahirkan anak dari hubungan seksual yang dipaksa menghadapi beberapa lapis diskriminasi. Perempuan yang berada dalam situasi perbudakan seksual dianggap secara seksual “mudah.” Perempuan yang diperkosa dianggap sebagai “barang bekas.” Anak-anak mereka sering mengalami diskriminasi, karena dianggap sebagai anak tidak sah yang lahir di luar nikah. Pemberian cap buruk kepada para perempuan dan anak-anak mereka tidak hanya mengakibatkan pengucilan sosial, tetapi juga sering menimbulkan masalah psikologis yang serius di dalam keluarga.

...ada satu kasus serius yang ditangani oleh Fokupers tetapi sangat terlambat sekali, artinya setelah korban mengalami pemerkosaan oleh banyak orang anggota ABRI dan perbudakan oleh beberapa orang anggota ABRI sampai korban hamil dan melahirkan beberapa anak dari pelaku yang berbeda. Saat itu korban sangat didiskriminasikan, diejek, dicemooh, difitnah, dan diisolir oleh lingkungannya. Mereka memberikan julukan kepada korban sebagai “feto puta” atau pelacur yang menjual dirinya kepada ABRI. Sampai korban tidak mau menerima dan melihat wajah anak-anaknya, akibat tekanan dari masyarakat yang ada di lingkungannya.²⁸⁰

347. Dalam banyak kasus di mana bapak biologisnya adalah anggota tentara Indonesia, ibu dan anak (atau anak-anak) ditinggalkan begitu saja di akhir masa tugas anggota tentara tersebut. Perjuangan untuk mempertahankan hidup sehari-hari, tanpa dukungan dari komunitas dan keluarga luas mereka, amat sangat berat, suatu keadaan yang bagi banyak perempuan berlanjut sampai hari ini:

Setelah anak lahir dan baru berumur beberapa bulan saja, PS303 [seorang anggota tentara Indonesia] pergi. Setelah itu saya hidup dengan dua orang anak tersebut. Waktu saya harus ke sawah saya harus membawa serta mereka berdua karena tidak ada orang yang mengurus mereka. Untung ada adik ipar saya... [ia kemudian bersedia] memelihara anak-anak saya sewaktu saya ke sawah.²⁸¹

348. Para orangtua tunggal ini, tanpa perlindungan dari sosok laki-laki tradisional suami atau ayah, rentan terhadap pemaksaan seksual dari laki-laki lain. Dalam pernyataan berikut ini, perempuan yang mengasuh anaknya yang lahir akibat hubungan perbudakan seksual oleh komandan Koramil terpaksa menerima pemaksaan seksual oleh seorang Timor-Leste anggota tentara Indonesia:

Setelah anak saya berumur delapan tahun, seorang ABRI orang pribumi bernama PS373 datang memaksa saya dan mau menembak kakak saya. Ia berjanji bahwa ia akan mengawini saya, tetapi setelah saya mempunyai anak dari dia dan pada waktu dia bertugas di Buicarean [Desa Bahalarauain, Viqueque, Viqueque] ia malah menikah dengan orang lain dan tidak peduli sama saya dan anak kami.²⁸²

349. Sebagian perempuan, dengan segala kesulitan, bisa memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya dan menyekolahkan mereka.

Sekarang ini saya ditinggalkan oleh PS374 [orang Indonesia] dengan tiga orang anak. Ada yang sudah menyelesaikan pendidikan. Ini berkat kerja keras dari saya mencari nafkah untuk mereka dan menyekolahkan mereka.²⁸³

350. Yang lainnya tidak begitu beruntung dan tidak bisa memberi anak-anak mereka pendidikan yang sangat diperlukan untuk masa depan yang lebih baik:

Saya punya empat anak dari tentara Indonesia. Satu meninggal, tinggal tiga anak... Karena kita berperang untuk mendapatkan kemerdekaan, saya menerima [apa yang menimpa diri saya] dengan tangan terbuka. Mungkin di masa depan, negara akan memberi perhatian kepada kami. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Yang saya lakukan untuk mendukung perjuangan adalah menyerahkan diri saya kepada tentara Indonesia untuk menyelamatkan penduduk lain. Mungkin kalau tidak ada perang, saya bisa jadi perempuan yang baik. Tetapi tidak apa-apa, karena semua ini [kemerdekaan] kita semua orang Timor inginkan. Ini adalah konsekuensi perang... Saya minta bantuan... untuk menyekolahkan tiga anak saya, supaya masa depan mereka cerah seperti anak-anak lain. Karena perang saya diperlakukan seperti kuda oleh tentara Indonesia yang mengambil saya secara bergiliran dan membuat saya hamil beberapa kali. Tetapi sekarang saya tidak kuat lagi untuk menjamin masa depan anak saya.²⁸⁴

351. Gereja Katolik berperan penting selama masa konflik di Timor-Leste dalam memberikan tempat tinggal dan perlindungan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perlindungan bagi korban pemerkosaan.* Walaupun demikian, dalam beberapa kasus Gereja Katolik tidak bisa mengatasi prasangkanya terhadap perempuan korban perbudakan seksual dan anak-anak mereka. Tanpa memahami unsur paksaan dalam perbudakan seksual, para pejabat Gereja kadang-kadang salah menganggap perbudakan seksual sebagai hubungan seksual di luar nikah. Bagi para perempuan korban, khususnya mereka yang melahirkan anak dari hubungan paksa beruntun, pengalaman mereka dihinakan oleh Gereja sangat membekas dalam jiwa mereka. Anak-anak yang ditolak untuk dibaptis tidak hanya dicampakkan dari kehidupan normal yang begitu didambakan ibu mereka. Ibu mereka juga menghadapi konsekuensi praktis, seperti kesulitan mendaftarkan anak-anak di sekolah yang mensyaratkan sertifikat pembaptisan:

Anggota keluarga dari suami saya [sudah meninggal] maupun keluarga saya...mendukung saya sehingga saya merasa hidup saya sedikit tenang. Walaupun masyarakat mengejek dan menjauhi saya, namun saya tetap tegar untuk menghadapinya. Pihak Gereja tidak mendukung saya dan melarang saya membaptis anak-anak saya. Tahun 2000 sesudah merdeka baru pastor dan penanggung jawab gereja memperbolehkan anak-anak saya dibaptis.²⁸⁵

352. Dalam kesaksian berikut, korban perbudakan seksual beruntun dan anak-anaknya dipermalukan di depan umum oleh Gereja, yang berakibat pada pengucilan dari semua kegiatan keagamaan selama 16 tahun:

Saya dikucilkan bukan oleh keluarga, tetapi oleh lingkungan masyarakat dan Gereja. Pada saat saya dicemoohkan oleh masyarakat, ayah saya berkata, "Bagaimanapun juga dia adalah anak kami. Dosa dia merupakan dosa kami juga, dan itu merupakan sebuah beban yang harus dipikul oleh kami sebagai orangtua..."

Pada saat saya dan anak saya sudah berbaris di depan altar untuk menerima sakramen pembaptisan dari Pastor, kami hanya selang dua orang baru mendapat gilirannya, tiba-tiba saya ditarik keluar dari barisan oleh penanggungjawab gereja. Katanya Pastor yang menyuruh. Anak saya tidak diizinkan dibaptis karena katanya ia bukan hasil dari hubungan yang sah. Saya dan orangtua saya tidak diizinkan untuk menerima komuni, mengaku dosa di gereja, atau diperbolehkan untuk membacakan doa apapun pada bulan Bunda Maria. Dari 1980 sampai 1996, rumah saya tidak mendapat giliran untuk dua Bunda Maria dan Hati Kudus Yesus. Saya harus menunggu sampai ABRI tidak lagi hidup bersama kami, baru saya

* Misalnya lihat kasus TC (paragraf 106, di atas); lihat pula Pernyataan HRVD 03335 yang menyebutkan bahwa Gereja memberikan perlindungan kepada perempuan yang mengalami pemerkosaan berkali-kali oleh anggota pasukan keamanan.

diizinkan berpartisipasi lagi secara aktif dalam kegiatan Gereja, termasuk diizinkan mengaku dosa serta menerima komuni.²⁸⁶

Berpisah atau rujuk

353. Reaksi dari suami korban kekerasan seksual yang dilakukan terhadap istri adalah faktor penting yang memengaruhi kemampuan perempuan untuk pulih. Komisi telah mendengar kesaksian dari perempuan yang telah mengalami perbudakan seksual dan pemerkosaan yang suaminya tidak dapat menerima apa yang telah terjadi pada mereka dan kemudian meninggalkan mereka:

Suami saya mengirim dua surat ke saya [di Timor Barat] pada April 2001, meski saya hanya terima satu surat. Dia bilang dia masih hidup dan dia sudah dengar saya punya anak dari [Komandan Laksaur] PS314. Dalam surat, dia minta saya pulang bersama anak saya. Surat kedua jatuh ke tangan Kostrad di perbatasan dan diberikan ke PS314. Ketika PS314 terbunuh, saudaranya PS194 datang ke kuburan dan mengancam akan membawa anak saya...Saya lari dari rumah dan mendaftar ke UNHCR [untuk pemulangan pengungsi]. Setelah ditolak tiga kali, teman saya berhasil mendaftarkan saya. Saya pergi tanpa sepengetahuan PS194. Saat sampai di rumah, suami saya sudah punya istri baru. Ketika saya mendekati, dia bilang dia tidak mau saya lagi sebagai istri. Saya tahu saya melahirkan anak anggota Laksaur tetapi ini karena terpaksa. Kalau saya tidak menuruti perintah mereka, saya pasti sudah mati.²⁸⁷

354. Pada sisi lain, Komisi juga menerima pernyataan-pernyataan dari perempuan yang telah mengalami kekerasan seksual yang suami mereka bisa menerima kenyataan bahwa yang telah terjadi adalah di luar kuasa istri mereka. Para perempuan yang telah mengalami pemerkosaan dan perbudakan seksual ini diterima oleh suami mereka:

Di dalam kapal [menuju pembuangan di Ataúro]...saya bertemu dengan suami saya. Setelah beberapa minggu saya mulai menceritakan tentang apa yang menimpa pada diri saya. Tetapi suami saya masih tetap mau menerima saya sebagai istrinya.²⁸⁸

355. Dalam pernyataan berikut ini, seorang perempuan yang diperkosa berulang kali dalam penahanan selama berbulan-bulan mengungkapkan pelanggaran seksual yang dialaminya kepada suaminya. Rujuk di antara keduanya tidak serta-merta terjadi. Masalah ini dibahas dalam pertemuan yang melibatkan kedua keluarga, dan seorang pastor diminta untuk menjadi penengah:

Tidak lama setelah [saya] kembali, suami sayapun dibebaskan dari penjara Ataúro. Lalu keluarga dari kedua belah pihak kami berkumpul kembali untuk membahas mengenai semua masalah yang saya alami selama beberapa bulan di tangan militer Indonesia.

Pada satu waktu saya dan suami saya berkumpul bersama seorang pastor. Pada kesempatan itu saya langsung memberitahukan kepada suami saya bahwa semuanya saya kembalikan kepada dia karena apa yang mereka [militer Indonesia] lakukan itu dipaksakan, bukan saya yang mau. Terus pastor bertanya kepada suami saya, apakah ia mau menerima kembali saya sebagai istri. Suami saya mau. Dari situlah kami berdua kembali ke Mau Chiga untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.²⁸⁹

356. Dalam beberapa kasus, perempuan dan anak-anak mereka, yang lahir akibat pemerkosaan, diterima oleh suami mereka. Dalam kasus berikut ini, seorang perempuan yang terpisah selama sekitar tiga tahun dari suaminya yang diasingkan, menyambut kembali suaminya dengan membawa seorang anak:

Pada 1985 suami saya pulang dari tempat pengasingan dan saya menceritakan [pelanggaran seksual yang saya alami sampai mendapatkan seorang anak] kepadanya. Dia mengatakan tetap akan menerima saya sebagai istrinya. Hal itu terjadi bukan karena keinginan saya tetapi ini adalah akibat dari perang, katanya.²⁹⁰

357. Pengertian dan penerimaan dari keluarga besar menjadi sangat penting, khususnya selama masa sebelum suami kembali:

Tidak ada seorang anggota keluarga, baik dari keluarga saya maupun keluarga suami saya, yang berusaha membela saya pada saat saya diperlakukan demikian. Sebab waktu itu...nyawa mereka juga terancam. Semua keluarga tidak mengejek saya sebab mereka tahu persis keadaan saya waktu itu. Mereka mendukung saya dan mengatakan bahwa semua yang terjadi bukan atas kehendak saya, melainkan itu karena tekanan situasi. Tidak lama sesudah saya hamil, suami saya dibebaskan dari penjara Lospalos. Pada saat tiba di rumah dia tidak memarahi saya, melainkan dia mengatakan bahwa semua itu terjadi karena situasi. Ia bersedia menerima anak yang saya kandung sebagai anak kandungnya sendiri. Waktu anak saya mau dibaptis, pastor tidak berkata apa-apa sebab pastor tidak tahu anak yang itu bukan anak suami saya. Pastor bersedia membaptis anak saya.²⁹¹

Temuan

Kekerasan seksual oleh anggota Fretilin dan UDT

358. Komisi menemukan bahwa:

1. Anggota-anggota partai Fretilin dan UDT terlibat dalam pemerkosaan dan kekerasan seksual selama konflik politik internal 1974-1976 dan pada waktu yang lain dalam periode mandat Komisi. Namun kecilnya angka kejadian yang dilaporkan ke Komisi (dua kasus pelakunya UDT dan satu Fretilin) menunjukkan bahwa kejadian-kejadian ini bersifat terisolasi dan tidak sistematis.

Kekerasan seksual oleh anggota Falintil

359. Komisi menemukan bahwa:

2. Anggota-anggota Falintil juga terlibat dalam pemerkosaan dan kekerasan seksual selama masa pendudukan Indonesia. Dalam beberapa kasus, pelakunya mendapat impunitas karena masyarakat enggan melaporkan kegiatan Falintil kepada pihak yang berwajib. Namun, sedikitnya jumlah kasus yang dilaporkan kepada Komisi menunjukkan bahwa kejadian-kejadian ini terisolasi dan tidak sistematis.

Pemerkosaan dan penyiksaan seksual oleh anggota pasukan keamanan Indonesia

360. Komisi menemukan bahwa selama masa invasi dan pendudukan Timor-Leste:

3. Anggota pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantunya terlibat dalam pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan tindak kekerasan seksual lain (selain perbudakan seksual) yang meluas dan sistematis yang diarahkan terutama pada perempuan Timor-Leste yang rentan.

361. Komisi mendasarkan temuan ini pada wawancara dan pernyataan dari ratusan korban yang telah dengan berani memberikan kesaksian tangan pertama dari pengalaman pribadi mereka, serta bukti-bukti lain yang menguatkan yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan saksi lain dan dokumen-dokumen yang dipelajari oleh Komisi. Bukti dari para korban perorangan dianggap secara khusus dapat dipercaya karena adanya dampak negatif dan trauma pribadi pada para korban yang terkait dengan penyampaian informasi seperti ini kepada suatu lembaga resmi.

4. Praktik-praktik kelembagaan serta kebijakan resmi maupun tidak resmi dari pasukan keamanan Indonesia membiarkan dan mendorong pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan penghinaan seksual terhadap

perempuan Timor-Leste oleh anggota angkatan bersenjata Indonesia dan kelompok-kelompok pembantu mereka yang berada di bawah komando dan kendali mereka.

362. Temuan ini didasarkan atas bukti yang kuat dan didukung oleh banyak bukti lain yang menunjukkan bahwa:

- pelanggaran-pelanggaran tersebut secara umum dilakukan di berbagai institusi militer; dan
 - para komandan militer dan pejabat sipil mengetahui bahwa para prajurit yang berada di bawah komando mereka secara rutin menggunakan kompleks dan alat-alat militer untuk memerkosa dan menyiksa perempuan, dan tidak mengambil langkah apapun juga untuk menghalangi terjadinya kegiatan-kegiatan ini atau untuk menghukum mereka yang terlibat. Sebaliknya dalam beberapa kasus, para komandan dan pejabat itu sendiri juga menjadi pelaku kekerasan seksual. Di tingkat menengah dan atas, hal ini juga melibatkan praktik seperti menyediakan perempuan muda yang dapat diperkosa sesuai permintaan dari tamu yang berkunjung, dan meneruskan “izin untuk memerkosa”, atau “pemilikan” perempuan-perempuan muda itu ke perwira berikutnya ketika masa tugas mereka berakhir.
5. Para korban penyiksaan seksual biasanya adalah perempuan yang oleh pasukan keamanan dianggap memiliki hubungan dengan gerakan pro-kemerdekaan. Para perempuan ini sering menjadi sasaran kekerasan pengganti. Yaitu karena suami atau saudara laki-laki yang dicari tentara tidak ada di tempat, perempuan tersebut akan diperkosa dan disiksa sebagai cara menyerang tidak langsung sasaran yang tidak hadir.

363. Sudah umum bagi perempuan-perempuan ini dibawa ke instalasi militer di mana mereka kemudian ditanyai mengenai kegiatan suami atau anggota keluarga yang tidak ada di tempat dan menjadi sasaran berbagai metode penyiksaan yang tidak senonoh. Dalam kasus-kasus lain, perempuan diperkosa di rumah mereka atau di tempat lain pada saat terjadi operasi militer.

6. Komisi menemukan bahwa tindakan-tindakan berikut ini diarahkan pada perempuan Timor-Leste di dalam instalasi resmi militer Indonesia:
- perusakan organ seksual perempuan, termasuk memasukkan baterai ke dalam vagina dan menyundut puting susu serta alat-alat kelamin dengan rokok
 - penggunaan arus listrik terhadap alat kelamin, payudara, dan mulut
 - pemerkosaan berkelompok oleh anggota-anggota pasukan keamanan
 - memaksa tahanan untuk melakukan kegiatan seksual dengan sesama tahanan, sambil disaksikan dan dihina oleh anggota-anggota pasukan keamanan
 - pemerkosaan tahanan setelah masa penyiksaan seksual yang lama

- pemerkosaan perempuan yang tangan dan kakinya dibelenggu dan matanya ditutup. Dalam sebagian kasus, perempuan dalam keadaan seperti ini diperkosa sampai pingsan
 - pencabutan paksa rambut kemaluan disaksikan oleh laki-laki anggota tentara
 - pemerkosaan perempuan hamil. Komisi berkali-kali menerima bukti mengenai ini, termasuk satu kesaksian tentang seorang perempuan yang diperkosa satu hari sebelum melahirkan
 - memaksa korban telanjang, atau dianiaya secara seksual di depan orang-orang yang tidak dikenal, teman-teman, dan anggota-anggota keluarga. Setidaknya dalam satu kasus, seorang perempuan diperkosa di depan ibunya sendiri dan kemudian dibunuh. Yang lebih umum, para korban diperkosa dan disiksa di depan anak-anaknya
 - perempuan diperkosa di depan sesama tahanan sebagai cara menyorok korban itu sendiri maupun para tahanan lain.
 - menempatkan perempuan di dalam tangki air untuk jangka waktu yang lama, termasuk membenamkan kepalanya, sebelum diperkosa
 - menggunakan ular dalam penyiksaan seksual untuk menimbulkan rasa takut
 - ancaman terhadap perempuan bahwa anak mereka akan dibunuh atau disiksa jika mereka menolak diperkosa atau melaporkan pemerkosaan yang dialaminya
 - pemerkosaan yang berulang oleh banyak anggota pasukan keamanan (tidak dikenal). Dalam sejumlah kasus, para perempuan mengatakan tidak dapat menghitung berapa orang yang memerkosa mereka. Komisi menerima bahwa sejumlah korban diperkosa oleh beberapa anggota militer setiap hari selama berbulan-bulan dalam penahanan
 - seks oral secara paksa
 - kencing ke dalam mulut korban
 - pemerkosaan dan kekerasan seksual tanpa pandang bulu terhadap perempuan yang sudah menikah, yang belum menikah, dan remaja yang menurut hukum masih anak-anak
 - membuat dan menyimpan daftar perempuan setempat yang dapat secara rutin dipaksa datang ke pos atau markas militer agar dapat diperkosa oleh anggota tentara. Daftar-daftar ini beredar di antara kesatuan-kesatuan tentara. Dalam beberapa kasus, para perempuan diperintahkan datang ke pos militer setiap pagi, untuk diperkosa oleh anggota-anggota pasukan keamanan.
7. Tingkat pemerkosaan dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual mencerminkan pola dan tingkat kegiatan militer pada masa itu. Pelanggaran seksual meningkat dalam periode operasi militer besar, dan menurun ketika operasi seperti ini tidak begitu sering dilakukan.

8. Perempuan-perempuan yang menyerah kepada pasukan keamanan Indonesia secara khusus lebih rentan terhadap pemerkosaan dan penyiksaan seksual. Pada tahun-tahun awal konflik, 1975-1978, banyak dari para korban pelanggaran seksual adalah orang-orang yang telah menyerah dan tinggal di tempat-tempat tinggal sementara yang disediakan oleh militer Indonesia, atau baru kembali ke rumah masing-masing setelah menyerah.
9. Perempuan-perempuan yang menyerah dari gunung-gunung, yang diketahui memiliki hubungan dengan pasukan gerilya atau yang diduga mengetahui lokasi para gerilyawan dan pendukung mereka, dipaksa membantu militer Indonesia mencari kelompok-kelompok ini. Dalam sejumlah kasus, perempuan dijadikan sasaran penyiksaan, pemerkosaan, dan perbudakan seksual, ketika mereka ikut serta dalam operasi-operasi militer seperti itu. Perempuan juga direkrut paksa ke dalam pasukan pertahanan sipil, dan dipaksa melakukan ronda di desa mereka. Ketika melakukan ronda, yang diawasi oleh laki-laki bersenjata, perempuan umum diperkosa dan dilecehkan secara seksual.
10. Penahanan massal menyusul pemberontakan sipil pada 1981-1983 mengakibatkan peningkatan jumlah perempuan yang diperkosa atau ditempatkan dalam situasi perbudakan seksual oleh anggota pasukan keamanan. Ini memperkuat temuan bahwa ada hubungan antara operasi militer dan tujuannya dengan skala pemerkosaan atau pelanggaran seksual lainnya yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan.

364. Dalam beberapa kasus operasi-operasi militer skala besar disertai dan diikuti oleh pemerkosaan dan pelanggaran lain yang terkoordinasi dan dalam skala besar yang diarahkan pada penduduk perempuan yang terlibat dalam operasi tersebut.

- Menyusul serangan Falintil terhadap Koramil Dare dan pos-pos ABRI lainnya di Dare dan Mau Chiga (Hato Builico, Ainaro), pada 1982, anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia memisahkan perempuan dari anggota masyarakat yang lain. Mereka kemudian melakukan pemerkosaan secara perorangan maupun berkelompok, penyiksaan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual terhadap banyak sekali perempuan yang rentan ini. Kejahatan-kejahatan ini berlanjut selama beberapa bulan, dan dilakukan oleh para komandan militer, prajurit berpangkat rendah, dan anggota-anggota Hansip sebagai pelaku. Komisi menemukan bahwa komandan militer dan pejabat sipil di Distrik Ainaro pada periode ini bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran besar-besaran hak asasi manusia ini.
- Kekerasan seksual ekstrem terhadap perempuan Timor-Leste juga digunakan untuk menindas penduduk setempat setelah terjadinya kebangkitan di Kraras, Bibileo (Viqueque, Viqueque) pada 1983. Ini termasuk pemaksaan perbudakan seksual terhadap perempuan.

- Penangkapan massal sebagai bagian dari operasi militer berakibat pada penganiayaan seksual terhadap perempuan di dalam tahanan, Ini dialami oleh para tahanan perempuan di Hotel Flamboyan di Bahu (Baucau Kota, Baucau), Koramil di Uatolari (Viqueque), dan di Penjara Balide (Comarca) di Dili, serta tempat-tempat penahanan lain.
11. Kekerasan skala besar selama 1999 mengakibatkan peningkatan besar jumlah pemerkosaan terhadap perempuan, khususnya yang dipindahkan dari desa tempat tinggalnya atau menjadi pengungsi. Kejadian-kejadian kekerasan seksual ini melibatkan anggota kelompok-kelompok milisi, TNI, dan dalam beberapa kasus, anggota-anggota milisi dan TNI bertindak bersama-sama.

Impunitas bagi pelaku pemerkosaan dan penyiksaan seksual

12. Praktik menangkap, memerkosa, dan menyiksa perempuan dilakukan secara terbuka, tanpa takut akan mendapatkan sanksi dalam bentuk apapun, oleh perwira tinggi militer, pejabat sipil, perwira militer rendah, perwira polisi, guru, dan anggota kelompok-kelompok pendukung seperti Hansip dan milisi. Ketika para korban kekerasan seksual atau anggota keluarga mereka melaporkan kepada pejabat penegak hukum yang berwenang mengenai apa yang terjadi, mereka pada umumnya ditanggapi dengan pengingkaran atau agresi. Dalam beberapa kasus anggota keluarga yang melapor dipukuli atau bahkan dihukum.
13. Tidak ada langkah praktis yang dapat dilakukan oleh orang Timor-Leste korban pemerkosaan atau kekerasan seksual untuk mendapatkan penyelesaian hukum bagi kejahatan-kejahatan seperti ini. Juga tidak ada jalan yang dapat ditempuh oleh para korban atau keluarga yang bertindak untuk mereka agar mendapatkan bantuan resmi untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran ini. Para korban tidak berdaya dan tidak dapat menghindar dari kekerasan oleh anggota-anggota pasukan keamanan.
14. Keikutsertaan dalam praktik-praktik seperti ini dan pembiaran terhadapnya oleh para komandan militer dan pejabat sipil, pengetahuan luas bahwa pemerkosaan dan penyiksaan seksual mendapatkan dukungan resmi, penggunaan fasilitas militer dan fasilitas resmi lainnya untuk tujuan ini, dan impunitas yang nyaris total bagi para pelaku membawa pada suatu keadaan di mana praktik-praktik seperti ini dapat dilakukan oleh anggota pasukan keamanan dengan sekehendaknya. Hal ini menyebabkan peningkatan kekerasan seksual pada-tahun setelah invasi, dan partisipasi yang semakin meluas oleh anggota tentara berpangkat rendah dan anggota pasukan-pasukan pendukung, seperti Hansip dan milisi, yang beroperasi di

bawah kendali dan perlindungan pasukan keamanan. Dalam beberapa kasus anggota Hansip atau pejabat sipil tingkat rendah mengambil perempuan secara paksa dan menyerahkannya kepada komandan militer, untuk mendapatkan imbalan berupa kenaikan status dan imbalan lainnya.

365. Anggota-anggota kepolisian Indonesia juga terlibat dalam penyiksaan dan pemerkosaan, tetapi tidak dalam tingkatan yang sama dengan militer. Polisi menikmati impunitas umum yang sama dalam melakukan pelanggaran seksual, yang juga didapatkan oleh anggota pasukan keamanan yang lain.

366. Juga ada kejadian-kejadian dalam mana laki-laki anggota pasukan keamanan Indonesia memerkosa (termasuk melakukan seks mulut secara paksa dan bentuk-bentuk pelanggaran seksual lainnya) terhadap laki-laki tahanan dan penduduk sipil Timor-Leste. Tetapi kejadian-kejadian seperti ini lebih jarang daripada kekerasan seksual terhadap perempuan Timor-Leste.

Perbudakan seksual

15. Selama invasi dan pendudukan, ada praktik yang terus terjadi yang memaksa perempuan Timor-Leste menjadi budak seks para petugas militer. Kegiatan seperti ini dilakukan secara terbuka, tanpa takut akan pembalasan, di dalam instalasi militer, di tempat-tempat resmi lain dan di dalam rumah-rumah pribadi para perempuan yang dijadikan sasaran. Dalam jumlah yang berarti kasus yang serupa, pemerkosaan dan penyerangan seksual dilakukan berulang kali di dalam rumah para korban, walaupun ada orangtua, anak-anak, dan anggota lain keluarga korban.
16. Sama dengan pemerkosaan, perbudakan seksual juga meningkat dramatis pada periode-periode operasi militer besar, dan menurun ketika operasi seperti ini kurang sering dilancarkan. Misalnya, 64% dari kasus perbudakan seksual yang dilaporkan kepada Komisi terjadi pada periode invasi dan pada periode operasi-operasi militer skala besar.
17. Adalah suatu praktik umum bagi anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia untuk menempatkan perempuan Timor-Leste dalam penahanan di markas militer untuk alasan-alasan yang tidak terkait dengan tujuan militer. Para perempuan ini, banyak di antaranya yang ditahan berbulan-bulan atau kadang-kadang bertahun-tahun, diperkosa setiap hari atau sesuai kehendak petugas tentara yang menguasai mereka, dan sering juga oleh prajurit yang lain. Selain itu mereka dipaksa melakukan pekerjaan rumahtangga tanpa dibayar.
18. Para korban jenis perbudakan seksual seperti ini tidak bebas untuk bergerak atau bepergian, atau bertindak bebas apapun. Umum bahwa “hak pemilikan” atas para perempuan ini dapat dipindahkan dari seorang petugas militer yang akan mengakhiri masa tugasnya kepada

petugas yang akan menggantikannya atau kepada petugas yang lain. Dalam beberapa situasi, perempuan yang dipaksa menjalani keadaan ini menjadi hamil dan melahirkan anak dari beberapa anggota tentara yang berbeda, selama tahun-tahun ketika mereka menjadi korban perbudakan seksual.

19. Pada umumnya, anggota tentara Indonesia yang adalah ayah dari anak-anak melalui pemerkosaan atau perbudakan seksual ini tidak mau bertanggung jawab untuk mendukung kesejahteraan anak-anak mereka. Para ibu dari anak-anak ini menghadapi kesulitan besar dalam menopang kehidupan mereka. Ini khususnya menjadi masalah karena para korban pemerkosaan dan perbudakan seksual militer Indonesia banyak dianggap sebagai “telah ternoda” dan tidak lagi layak untuk dinikahi oleh laki-laki Timor-Leste, dan mendapatkan stigma sosial yang berkelanjutan.
20. Metode-metode yang digunakan untuk memaksa perempuan Timor-Leste menjalani perbudakan seksual sering kali melibatkan penyiksaan oleh anggota pasukan keamanan, ancaman penyiksaan dan pembunuhan terhadap korban, anggota keluarga mereka, atau menjadikan komunitas mereka sebagai sasaran.

Impunitas bagi pelaku perbudakan seksual

21. Anggota-anggota tentara Indonesia memaksa perempuan memasuki keadaan perbudakan seksual di instansi-instansi militer atau di rumah mereka masing-masing secara terbuka, tanpa takut akan pembalasan. Impunitas penuh yang didapatkan oleh anggota-anggota pasukan keamanan, kemampuan mereka untuk membunuh dan menyiksa sesuka hati yang sudah terbukti, dan sifat sistematis dari pelanggaran-pelanggaran ini di seluruh penjuru wilayah ini tidak memberi para korban kemungkinan untuk lolos. Para perempuan yang menjadi sasaran dipaksa mengalami pelanggaran yang berulang dan menakutkan terhadap tubuh dan martabat pribadi mereka, atau menghadapi pilihan yang lebih membahayakan untuk diri sendiri, keluarga, atau komunitas mereka. Dalam situasi yang serbasalah ini, tidak ada harapan untuk mendapatkan bantuan dari petugas penegak hukum atau pihak-pihak berwenang lain, dan tidak ada dasar apapun untuk percaya bahwa keadaan ini akan berakhir dalam masa mendatang yang dekat.
22. Cakupan dan sifat dari pelanggaran yang dilakukan dan impunitas penuh yang dinikmati oleh berbagai tingkatan pelaku sudah diketahui secara luas pada seluruh jajaran pasukan keamanan dan pemerintah sipil Indonesia selama masa pendudukan. Impunitas ini tidak akan dapat berlanjut tanpa pengetahuan dan keterlibatan anggota-anggota tentara, kepolisian, dan pejabat-pejabat sipil tingkat tertinggi serta badan peradilan Indonesia.

Pelanggaran seksual sebagai alat teror dan degradasi

23. Selain pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual, berbagai pelanggaran seksual lainnya dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang sangat merendahkan martabat korban atau tidak senonoh secara budaya sering dilakukan di depan umum. Ini termasuk memaksa tahanan berjalan jauh dalam keadaan telanjang melewati penduduk, pemerkosaan di depan umum, dan banyak kejadian pemerkosaan dan penyiksaan di pos-pos militer, yang dilakukan di tempat-tempat di mana teriakan para korban bisa didengar oleh tahanan lain.
24. Cakupan dan sifat dari berbagai pelanggaran ini menunjukkan bahwa maksudnya tidak terbatas pada pemuasan pribadi para pelaku atau untuk mengakibatkan dampak langsung terhadap masing-masing korban. Tujuannya juga untuk mempermalukan dan merendahkan martabat rakyat Timor-Leste. Ini adalah upaya menghancurkan semangatnya untuk melawan, untuk memperkuat kenyataan bahwa mereka benar-benar tidak berdaya dan dapat menjadi sasaran perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan dari orang-orang yang menguasai keadaan dengan senjata. Anggota-anggota militer kerap memperlakukan dan berbicara kepada korban orang Timor-Leste seolah-olah mereka “lebih rendah daripada manusia.” Pola-pola seperti ini membantu membenarkan dan menyebarkan pandangan tersebut dalam jajaran personel keamanan, yang mengarah pada partisipasi yang luas dalam pelanggaran seksual.
25. Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan pelanggaran seksual adalah sarana yang digunakan sebagai bagian dari suatu kegiatan yang dirancang untuk menimbulkan rasa takut yang mendalam, ketidakberdayaan, dan keputusasaan pada orang-orang yang mendukung kemerdekaan. Pelanggaran seksual terhadap perempuan Timor-Leste, khususnya terhadap yang memiliki hubungan dengan anggota-anggota Fretilin dan Falintil, secara sengaja dilakukan dengan maksud menghancurkan harga diri dan semangat, tidak hanya para korban, tetapi semua yang mendukung gerakan kemerdekaan, dengan tujuan memaksa mereka agar menerima tujuan politik integrasi dengan Indonesia.

Jumlah seluruh korban kekerasan seksual

26. Komisi mencatat suatu kesimpulan yang tidak dapat dielakkan bahwa banyak korban pelanggaran seksual tidak tampil melapor kepada Komisi. Alasan-alasan bagi pelaporan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya ini mencakup kematian korban dan saksi (khususnya untuk periode awal konflik), korban berada di luar Timor-Leste (khususnya

di Timor Barat), penderitaan dan sifat sangat pribadi dari pengalaman bersangkutan, dan takut akan penghinaan sosial atau keluarga atau penolakan kalau pengalaman mereka diketahui umum. Sebab-sebab yang kuat untuk pelaporan yang lebih rendah daripada sebenarnya ini dan kenyataan bahwa 53 kasus pemerkosaan dan perbudakan seksual, bersama dengan bukti dari sekitar 200 wawancara lain yang telah dicatat, membawa Komisi ini pada penemuan bahwa jumlah pelanggaran seksual seluruhnya kemungkinan beberapa kali lebih tinggi daripada jumlah kasus yang dilaporkan. Komisi memperkirakan bahwa jumlah perempuan yang menjadi sasaran pelanggaran seksual berat oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia mencapai ribuan kasus, bukannya ratusan.

Dampak terhadap korban

27. Walaupun para korban kekerasan seksual samasekali tidak dapat dipersalahkan atau diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dipaksakan terhadap mereka, mereka sering terpinggirkan secara sosial atau diperlakukan dengan buruk oleh anggota keluarga mereka sendiri, anggota masyarakat, dan Gereja Katolik karena pengalaman yang mereka alami. Kesalahan pandangan tentang kekerasan seksual membuat perempuan korban terus menjadi korban.

Catatan akhir

1. United Nations, *Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict*, Laporan Akhir disampaikan oleh Gay J. McDougal, Pelapor Khusus mengenai Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini, New York: United Nations, 1998, E/CN.4/Sub.2/1998/13, halaman 7-8.
2. CAVR, Tim Peneliti Perempuan, Perempuan dan Konflik, April 1974 s/d Oktober 1999: Laporan Tim Penelitian Perempuan dan Konflik, FOKUPERS-CAVR, April 2004.
3. *Prosecutor v Jean-Paul Akayesu*, ICTR Case No ICTR-96-4-T, Trial Chamber Judgment, 2 September 1998, paragraf 598; *Prosecutor v Zejnil Delalic*, ICTY Case No IT-96-21, Trial Chamber Judgment, 16 November 1998, paragraf 479.
4. *Prosecutor v Zejnil Delalic*, ICTC Case No IT-96-21, Trial Chamber Judgment, 16 November 1998, paragraf 479. Diikuti dengan *Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, ICTY Case No IT-96-23 dan IT-96-23/1, Appeals Chamber Judgment, 12 Juni 2002, paragraf 127-133; *Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, ICTC Case No IT-96-23 dan IT-96-23/1, Appeals Chamber Judgment, 12 Juni 2002, paragraf 127-128.
5. *Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, ICTY Case No IT-96-23 dan IT-96-23/1, Trial Chamber Judgment, 22 Februari 2001, paragraf 460. Keputusan ini diperkuat pada tingkat banding: *Prosecutor v Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, ICTY Case No IT-96-23 dan IT-96-23/1, Appeals Chamber Judgment, 12 Juni 2002, paragraf 127-133.
6. Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan AA, Dili, 23 April 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, Dili, 28-29 April 2003.
7. Pernyataan HRVD 04309.

8. Pernyataan HRVD 04346.
9. Pernyataan HRVD 08160.
10. Lihat juga Pernyataan HRVD 03537, untuk kasus-kasus pemerkosaan oleh anggota Falintil yang dilaporkan selain lima kasus yang diuraikan dalam bagian ini.
11. Pernyataan HRVD 03184.
12. Pernyataan HRVD 03579.
13. Pernyataan HRVD 06400.
14. Pernyataan HRVD 06353.
15. Pernyataan HRVD 02571.
16. Pernyataan HRVD 01784.
17. Pernyataan HRVD 03574.
18. Pernyataan HRVD 04956 dan 04972.
19. Pernyataan HRVD 04083 dan 04085.
20. Pernyataan HRVD 05778.
21. Pernyataan HRVD 08370.
22. Pernyataan HRVD 06205.
23. Pernyataan HRVD 07463.
24. Pernyataan HRVD 07218.
25. Pernyataan HRVD 00163.
26. Pernyataan HRVD 07217.
27. Pernyataan HRVD 01671.
28. Wawancara CAVR dengan WA, Afolocai, Uatolari, Viqueque, 17 September 2003.
29. Pernyataan HRVD 07428; wawancara CAVR dengan XA, Becora, Cristo Rei/Dili Oriental, Dili, 13 Februari 2003; Macadique, Uatolari, Viqueque, 17 September 2003.
30. Wawancara CAVR dengan YA, Macadique, Uatolari, Viqueque, 17 September 2003.
31. Wawancara CAVR dengan ZA, Macadique, Uatolari, Viqueque, 17 September 2003.
32. Pernyataan HRVD 08067.
33. Wawancara CAVR dengan BB, Rotutu, Same, Manufahi, 22 April 2003; Pernyataan HRVD 04104.
34. Pernyataan HRVD 01613.
35. Pernyataan HRVD 05796.
36. Pernyataan HRVD 01370.
37. Pernyataan HRVD 05228.
38. Wawancara CAVR dengan Dulce Vitor, Bairo Formosa, Nain Feto/Dili Oriental, Dili, 13 Juni 2004.
39. Pernyataan HRVD 05393.
40. Pernyataan HRVD 02698.
41. Pernyataan HRVD 08038.
42. Pernyataan HRVD 07193.
43. Pernyataan HRVD 07271.
44. Pernyataan HRVD 03189.
45. Pernyataan HRVD 01612.
46. Wawancara CAVR dengan RB, Poros, Mehara, Tutuala, Lautém, 28 Oktober 2003.
47. Wawancara CAVR dengan SB1, Bahú, Baucau, Baucau, 27 Mei 2004.
48. Wawancara CAVR dengan TB, Lame Gua, Bahú, Baucau, Baucau, 26 Mei 2004.
49. Wawancara CAVR dengan UB1, Bahú, Baucau, Baucau, 11 Juni 2003; VB1 dan VB2, Bairro Alto, Bahú, Baucau, Baucau, 14 Juni 2003.
50. Wawancara CAVR dengan VB1, Bairro Alto, Bahú, Baucau, Baucau, 14 Juni 2003.
51. Wawancara CAVR dengan Zeferino Armando Ximenes, Teulale, Tirilolo, Baucau, Baucau, 13 Juni 2003.
52. Pernyataan HRVD 04932.
53. Pernyataan HRVD 07209.
54. Pernyataan HRVD 02721.

55. Pernyataan HRVD 03335.
56. Pernyataan HRVD 07747.
57. Pernyataan HRVD 02693.
58. Pernyataan HRVD 03767.
59. Pernyataan HRVD 00774.
60. Pernyataan HRVD 02516 dan 02527.
61. Pernyataan HRVD 02426.
62. Pernyataan HRVD 06679.
63. Pernyataan HRVD 04482.
64. Pernyataan HRVD 03681.
65. Pernyataan HRVD 00649.
66. APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) et al., *Laporan Kasus Pemerkosaan atas Diri TC*, Submisi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Indonesia), 22 Januari 1997.
67. Wawancara CAVR dengan Rui Pereira dos Santos, aldeia Bedalan, Bebora, 20 de Maio, Dom Aleixo/ Dili Ocidental, Dili, 24 Oktober 2004.
68. Pernyataan HRVD 07439.
69. Wawancara CAVR dengan Rui Pereira dos Santos, aldeia Bedalan, Bebora, 20 de Maio, Dom Aleixo/ Dili Ocidental, Dili, 24 Oktober 2004.
70. Pernyataan HRVD 05326.
71. Pernyataan HRVD 06238.
72. Pernyataan HRVD 06167.
73. Pernyataan HRVD 06237.
74. Fokupers, Basis data (lengkap dengan pernyataan tertulis) kekerasan berbasis gender 1999, Submisi kepada CAVR, 2004; Pernyataan HRVD F9369.
75. Pernyataan HRVD 03054.
76. Pernyataan HRVD 01857.
77. Pernyataan HRVD 02541.
78. Pernyataan HRVD 05837.
79. Pernyataan HRVD 01658.
80. Mário Viegas Carrascalão, Deposisi tertulis tentang Perempuan dan Keluarga Berencana, Submisi kepada CAVR, 28 April 2004.
81. Lihat Pernyataan HRVD 04652.
82. Pernyataan HRVD 06441.
83. The General Prosecutor of UNTAET, Indictment against João Franca da Silva alias Jhoni Franca et al., Case No. BO-06, 1-99-SC (04a/2001).
84. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9466; F9482; dan F9474.
85. Pernyataan HRVD 06768.
86. Wawancara CAVR dengan FE, Lourba, Bobonaro, Bobonaro, 10 Juli 2003.
87. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9463.
88. Pernyataan HRVD 03631.
89. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9483.
90. Pernyataan HRVD 00297.
91. Pernyataan HRVD 00248.
92. Pernyataan HRVD 01204.
93. Pernyataan HRVD 01964.
94. Pernyataan HRVD 06296.
95. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9290.
96. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9291.
97. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9297; F9298.
98. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9382; 08980.
99. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9383.

100. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9383.
101. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9362.
102. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9480.
103. Pernyataan HRVD 06437.
104. Pernyataan HRVD 02139.
105. Pernyataan HRVD 06200.
106. ZE1, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan ZE1, Ermera, 18 Maret 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, Dili, 28-29 April 2003; Pernyataan HRVD 02183.
107. Wawancara CAVR dengan Bosco da Costa, Malilat, Bobonaro, Bobonaro, 10 Juli 2003.
108. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9452.
109. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9453.
110. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9453; 05116.
111. Pernyataan HRVD 08459.
112. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9320; 01273.
113. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9389.
114. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9266.
115. Pernyataan HRVD 08462.
116. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9268.
117. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9323.
118. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9243.
119. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9258; wawancara CAVR dengan LF1, Kuluoan, Zumalai, Covalima, 12 April 2003.
120. Pernyataan HRVD 03622.
121. Pernyataan HRVD 02466.
122. Pernyataan HRVD 02149.
123. PF, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan PF, Nitibe, Lela Ufe, Hau Ufe, Oecussi, 3 April 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, Dili, 28-29 April 2003; Pernyataan HRVD 00362.
124. Pernyataan HRVD 07421.
125. Pernyataan HRVD 02110.
126. Pernyataan HRVD 08473.
127. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948* (berlaku mulai 10 Desember 1948), pasal 4; *Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966*, dibuka untuk penandatanganan pada 16 Desember 1966 (berlaku mulai 23 Maret 1976), pasal 8; *Konvensi tentang Perbudakan* (berlaku mulai 25 September 1926).
128. United Nations, *Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict* [Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini: Pemerkosaan Sistematis, Perbudakan Seksual, dan Praktik-praktik Seperti Perbudakan dalam Konflik Bersenjata], Laporan Akhir disampaikan oleh Gay J. McDougall, Pelapor Khusus PBB mengenai Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini, New York: United Nations, 1998, E/CN.4/Sub.2/1998/13.
129. Pernyataan HRVD 03201.
130. Pernyataan HRVD 04943.
131. Wawancara CAVR dengan VF, Umanaruk, Lacro, Manatuto, 20 Maret 2003.
132. Lihat Pernyataan HRVD 04741.
133. Pernyataan HRVD 01022.
134. Pernyataan HRVD 01022.
135. Pernyataan HRVD 06239.
136. Pernyataan HRVD 06159.
137. Pernyataan HRVD 06205.
138. Pernyataan HRVD 03474; 03492.
139. Pernyataan HRVD 07179.

140. Pernyataan HRVD 07179.
141. Pernyataan HRVD 07179.
142. Pernyataan HRVD 06479.
143. Pernyataan HRVD 03344; 03346.
144. Wawancara CAVR dengan HG, Chai (Tsai), Lore I, Lospalos, Lautém, 10 Juli 2003.
145. Pernyataan HRVD 07725.
146. Pernyataan HRVD 07725.
147. Pernyataan HRVD 01686.
148. Pernyataan HRVD 03492; 03498; 04018; 04057.
149. Pernyataan HRVD 00664.
150. Pernyataan HRVD 06542.
151. Pernyataan HRVD 02330.
152. Pernyataan HRVD 01504.
153. Pernyataan HRVD 06609.
154. Pernyataan HRVD 06609.
155. Wawancara CAVR dengan HG, Chai (Tsai), Lore I, Lospalos, Lautém, 10 Juli 2003.
156. Wawancara CAVR dengan AH, Lore II, Lospalos, Lautém, 10 Juli 2003.
157. Wawancara CAVR dengan BH, Lore II, Lospalos, Lautém, 10 Juli 2003.
158. Wawancara CAVR dengan CH, Titalari, Lore I, Lospalos, Lautém, 10 Juli 2003.
159. Wawancara CAVR dengan IH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 28 Mei 2003; Pernyataan HRVD 07196.
160. Wawancara CAVR dengan JH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 28 Mei 2003.
161. Wawancara CAVR dengan GH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 30 Mei 2003.
162. Wawancara CAVR dengan AI, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 29 Mei 2003.
163. Wawancara CAVR dengan LH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 29 Mei 2003.
164. Wawancara CAVR dengan NH dan MH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 29 Mei 2003.
165. Wawancara CAVR dengan OH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 30 Mei 2003.
166. Wawancara CAVR dengan OH1, Dare, Hato Builico, Ainaro, 1 Juni 2003.
167. Wawancara CAVR dengan QH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 17 Maret 2003; Pernyataan HRVD 07269.
168. Wawancara CAVR dengan RH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 31 Mei 2003.
169. Wawancara CAVR dengan SH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 28 Mei 2003.
170. Wawancara CAVR dengan TH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 28 Mei 2003.
171. Wawancara CAVR dengan Albertina Martins, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 28 Mei 2003.
172. Wawancara CAVR dengan NK, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 28 Mei 2003.
173. Wawancara CAVR dengan UH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 28 Mei 2003.
174. Wawancara CAVR dengan VH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 28 Mei 2003.
175. Wawancara CAVR dengan WH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 28 Mei 2003.
176. Wawancara CAVR dengan BI, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 28 Mei 2003.
177. Wawancara CAVR dengan GH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 30 Mei 2003
178. Pernyataan HRVD 04910.
179. Pernyataan HRVD 07234.
180. Abílio dos Santos, Sekretaris Desa Mau Chiga, Daftar Korban 20 Agustus 1982 [tulisan tangan], Submisi kepada CAVR, Mei 2003.
181. Wawancara CAVR dengan Adriana do Rego, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 31 Mei 2003.
182. Wawancara CAVR dengan OH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 30 Mei 2003.
183. Wawancara CAVR dengan JI, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 30 Mei 2003; Pernyataan HRVD 07191.
184. Wawancara CAVR dengan KI, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 31 Mei 2003; pernyataan HRVD 07241.
185. XH, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan XH, 17 Maret 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, Dili, 28 April 2003.

186. Pernyataan HRVD 05299.
187. Pernyataan HRVD 03869.
188. Pernyataan HRVD 05212.
189. MI, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan MI, Lalerek Mutin, Bibileo, Viqueque, Viqueque, 24 Maret 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, Dili, 29 April 2003.
190. Pernyataan HRVD 07440.
191. Pernyataan HRVD 05746.
192. Pernyataan HRVD 06567.
193. Pernyataan HRVD 01733.
194. Pernyataan HRVD 06204.
195. Pernyataan HRVD 06381.
196. Pernyataan HRVD 06380.
197. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9315.
198. Pernyataan HRVD 05125.
199. Pernyataan HRVD 08470.
200. Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 21 September 2004.
201. The General Prosecutor of the Democratic Republic of East Timor, Indictment against Paulo Gonçalves et al., Case No. B0-84-99-SC (08-2002).
202. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9497.
203. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9400.
204. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9433.
205. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9280.
206. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9478.
207. Pernyataan HRVD 01854.
208. Pernyataan HRVD 01860.
209. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9401.
210. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9485.
211. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD 9488.
212. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD 9488.
213. Pernyataan HRVD 05537.
214. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9366.
215. Pernyataan HRVD 01799; Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9434; 01799.
216. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9486; Pernyataan HRVD 01855.
217. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9386.
218. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9387.
219. Pernyataan HRVD 08397.
220. Pernyataan HRVD 00247.
221. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9470; F9420; F9411; 99BOB016; 99BOB024.
222. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9420.
223. Karen Campbell-Nelson, Yooke Adelina Damapolii, Leonard Simanjuntak, dan Ferderika Tadu Hungu, Perempuan dibawa/h Laki-laki yang Kalah: Kekerasan terhadap Perempuan Timor Timur dalam Kamp Pengungsian di Timor Barat, JKPI dan PIKUL, Kupang, tanpa tahun, halaman 217-242.
224. VF1, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan VF1, Umanaruk, Lacló, Manatuto, 20 Maret 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, Dili, 28-29 April 2003.
225. Wawancara CAVR dengan RJ, Bahú, Baucau, Baucau, 10 Juni 2003.
226. Wawancara CAVR dengan SJ, Bahú, Baucau, Baucau, 27 Mei 2004.
227. Pernyataan HRVD 07792.
228. Pernyataan HRVD 09776.

229. XJ, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan XJ, Ataúro, Dili, 7 Maret 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenerjaan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003.
230. Pernyataan HRVD 03936.
231. Pernyataan HRVD 05303.
232. Pernyataan HRVD 03357.
233. Pernyataan HRVD 03346.
234. Wawancara CAVR dengan BK, Mehara, Tutuala, Lautém, 31 Oktober 2003.
235. Wawancara CAVR dengan CK, Lore I, Lospalos, Lautém, 10 Juli 2003.
236. DK, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan DK, Mehara, Tutuala, Lautém, Februari 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenerjaan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003.
237. Wawancara CAVR dengan EK, Meti Aut, Dili, 4 Mei 2004.
238. Wawancara CAVR dengan EK, Meti Aut, Dili, 4 Mei 2004.
239. Pernyataan HRVD 08342.
240. KK, Ringkasan Pernyataan, dipersiapkan oleh CAVR dari wawancara dengan KK, Akadiru-Hun, Cristo Rei/Dili Oriental, Dili, 7 Januari 2003, untuk Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenerjaan Politik, Dili, 17-18 Februari 2003.
241. Wawancara CAVR dengan NK, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 29 Mei 2003.
242. Wawancara CAVR dengan PK, Porlamanu, Mehara, Tutuala, Lautém, 30 Oktober 2003.
243. Pernyataan HRVD 04735.
244. Wawancara CAVR dengan SK, Vila Verde, Dom Aleixo/Dili Ocidental, Dili, 23 Mei 2003 dan 15 Juli 2003.
245. Wawancara CAVR dengan DH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 28 Mei 2003.
246. Wawancara CAVR dengan TK, Souro, Lospalos, Lautém, 8 Juli 2003.
247. Wawancara CAVR dengan UK, Souro, Lospalos, Lautém, 8 Juli 2003.
248. Pernyataan HRVD 08754.
249. Pernyataan HRVD 01617.
250. Pernyataan HRVD 04235.
251. Pernyataan HRVD 06385.
252. Wawancara CAVR dengan DL, Lourba, Bobonaro, Bobonaro, 10 Juli 2003.
253. Pernyataan HRVD 04493.
254. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9261.
255. Pernyataan HRVD 06867.
256. Wawancara CAVR dengan IH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 28 Mei 2003.
257. Wawancara CAVR dengan IH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 28 Mei 2003.
258. Rosalia Sciortino, "The Challenge of Addressing Gender in Reproductive Health Programs: Examples from Indonesia," <http://www.hsph.harvard.edu/Organizations/healthnet/SAsia?suchana/0310/sciortino.html> pada 31 Maret 2005.
259. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9258.
260. Pernyataan HRVD 03474; 03492.
261. Wawancara CAVR dengan XA, Dili, 13 Februari 2003.
262. Pernyataan HRVD 03501.
263. Wawancara CAVR dengan KL1, Dili, 19 Maret 2003.
264. Pernyataan HRVD 00678.
265. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9387.
266. Pernyataan HRVD 06400.
267. Pernyataan HRVD 02516.
268. Manuel Carceres da Costa, kesaksian diberikan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
269. Fokupers, Laporan Enam Bulanan mengenai Kekerasan terhadap Perempuan di Timor Timur, Januari-Juli 1999.

270. Wawancara CAVR dengan UK, Souro, Lospalos, Lautém, 8 Juli 2003.
271. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9487.
272. Pernyataan HRVD 06353.
273. Wawancara CAVR dengan ML, Maubara, Liquiça, 28 Maret 2003.
274. Wawancara CAVR dengan Luis Franco, Lalerek Mutin, Bibileo, Viqueque, Viqueque, 30 Mei 2003.
275. Wawancara CAVR dengan NL, Lalerek Mutin, Bibileo, Viqueque, Viqueque, 24 Maret 2003.
276. Wawancara CAVR dengan OL, Lifau, Laleia, Manatuto, 19 Maret 2003.
277. Wawancara CAVR dengan PL, Cailaco, Bobonaro, 8 Juli 2003.
278. Pernyataan HRVD 05299.
279. Pernyataan HRVD 01023.
280. Wawancara CAVR dengan Judith da Conceição dan Maria Barreto, Farol, Motael, Dom Aleixo/Dili Ocidental, Dili, 26 Oktober 2004.
281. Wawancara CAVR dengan MI, Lalerek Mutin, Bibileo, Viqueque, Viqueque, 24 Maret 2003.
282. Wawancara CAVR dengan QL, Beobe, Viqueque, Viqueque, 31 Mei 2003.
283. Wawancara CAVR dengan ML, Maubara, Liquiça, 28 Maret 2003.
284. Wawancara CAVR dengan AG, Afaloicai, Uatolari, Viqueque, 18 September 2003.
285. Wawancara CAVR dengan HG, Chai (Tsai), Lore I, Lospalos, Lautém, 10 Juli 2003.
286. Wawancara CAVR dengan OL, Lifau, Laleia, Manatuto, 19 Maret 2003.
287. Fokupers, 2004, Pernyataan HRVD F9268; 05125.
288. Wawancara CAVR dengan OH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 30 Mei 2003.
289. Wawancara CAVR dengan XH, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 17 Maret 2003.
290. Wawancara CAVR dengan BI, Mau Chiga, Hato Builico, Ainaro, 30 Mei 2003.
291. Wawancara CAVR dengan AH, Lore II, Lospalos, Lautém, 10 Juli 2003.



Chega!

Bagian 7
Bab 7.8.

Pelanggaran hak anak

Bab 7.8. Pelanggaran hak anak

2285 | Pendahuluan

2289 | Metode penelitian

2290 | Anak-anak dalam konflik politik bersenjata dan gerakan klandestin

2292 | Anak-anak sebagai TBO dan keikutsertaan dalam operasi

2293 | Pola-pola perekrutan TBO

2294 | **Boks:** Status TBO dalam militer

2296 | Jumlah TBO anak-anak

2297 | Mengapa ABRI merekrut anak-anak sebagai TBO?

2299 | Alasan bergabung

2300 | Pemaksaan

2302 | Tugas

2303 | Kondisi dan perlakuan

2304 | **Boks:** Kehidupan sehari-hari seorang TBO:

“Kalau kita mati, tidak masalah”

2305 | Jumlah korban

2307 | Pembayaran

2307 | Setelah Masa Tugas

2308 | Anak-anak dalam operasi: Operasi Keamanan

2311 | Anak-anak yang direkrut milisi pro-otonomi

2312 | Metode perekrutan

2316 | Kegiatan

2317 | Milisi anak yang dibunuh atau dihilangkan

2317 | Dampak

2318 | Anak-anak dalam jaringan klandestin

2319 | Bagaimana anak-anak terlibat

2321 | Alasan bergabung dengan Resistansi

2322 | Dampak

2323 | *Estafeta*

2324 | Anak-anak sebagai mata-mata dan pengintai

2326 | Kampanye

2329 | Anak-anak dalam Falintil

2330 | Perekrutan

2330 | 1975-1979

2334 | 1980-1989

2335 | 1990-1999

- 2336 | Latihan
- 2336 | Risiko bergabung dengan Falintil
- 2337 | Demobilisasi dan perubahan menjadi FDTL

2338 | Penahanan sewenang-wenang, pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak

2338 | Penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang

- 2338 | Pendahuluan
- 2339 | Pola penahanan anak-anak
- 2343 | Penahanan oleh pihak berwenang Indonesia
 - 2343 | 1975-1979
 - 2345 | 1980-1988

2347 | Boks: Seorang anak di Ataúro

2350 | 1989-1998

2351 | Boks: Kesaksian Naldo Gil da Costa

2353 | 1999

- 2354 | Penahanan oleh UDT
- 2355 | Penahanan oleh Fretilin

2357 | Pembunuhan dan penghilangan

- 2357 | Pendahuluan
- 2358 | Profil Pelanggaran
- 2361 | Invasi dan operasi militer
 - 2361 | 1975-1979
 - 2363 | 1980-1988
 - 2364 | 1989-1998
 - 2365 | 1999
- 2368 | Pembunuhan anak-anak oleh Fretilin dan Falintil
- 2368 | Periode konflik partai
 - 2370 | 1975-1979
 - 2372 | Serangan Falintil

2372 | Kekerasan seksual

- 2373 | Pola pelanggaran
 - 2374 | 1974-1979
 - 2377 | 1980-1989

2378 | Boks: Pengadilan kasus pemerkosaan anak di bawah umur, Pengadilan Dili, 1982

2382 | 1990-1998

2382 | 1999

2383 | Boks: Kisah ZM (sebagaimana diceritakan oleh bibinya, ZMI, pada November 1999)

2385 | Pindahan anak-anak ke Indonesia

2387 | Jumlah anak-anak yang dipindahkan ke Indonesia

2389 | Pola selama periode mandat

2389 | 1976-1979

2389 | **Anak-anak dibawa oleh anggota tentara perorangan**

2390 | Boks: Panti Asuhan Seroja

2392 | Boks: Yuliana (Bileki)

2394 | Boks: Penculikan seorang bayi di Ermera

2395 | Boks: Adopsi paksa: Kisah Aida

2396 | **Apakah pemindahan anak-anak adalah kebijakan resmi militer?**

2397 | **Pemindahan oleh pejabat pemerintah dan organisasi amal**

2398 | Boks: "Anak-anak Presiden"

2399 | 1980-1989

2400 | Boks: Kasus Thomas da Costa

2401 | **Lembaga keagamaan dan pemindahan anak-anak**

2402 | 1990-1998

2403 | **Anak-anak dibawa oleh lembaga-lembaga keagamaan**

2403 | **Program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Tenaga Kerja**

2405 | 1999

2409 | Kondisi anak-anak yang tinggal di Indonesia

2409 | Hilangnya identitas kebudayaan

2410 | Penganiayaan

2411 | Boks: Kisah Alfredo Reinado Alves

2413 | Kesimpulan dan temuan

2414 | Anak-anak dalam konflik bersenjata dan gerakan klandestin

2414 | Anak-anak yang digunakan militer Indonesia sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO)

2415 | Anak-anak dalam Falintil dan gerakan Klandestin

2417 | Anak-anak yang direkrut oleh milisi pro-otonomi pada 1999

- 2418 | Perlakuan tidak berperikemanusiaan terhadap anak-anak
- 2418 | **Penahanan sewenang-wenang**
- 2420 | **Pembunuhan sewenang-wenang terhadap anak-anak**
- 2422 | **Kekerasan seksual terhadap anak-anak**
- 2424 | **Pemindahan anak-anak ke Indonesia**

Daftar grafik:

- 2340 | **Grafik 1** : Persentase penahanan anak-anak
- 2341 | **Grafik 2** : Persentase penahanan anak-anak
- 2341 | **Grafik 3** : Pelanggaran (penyiksaan) dalam lintas-waktu, 1974-1999
- 2342 | **Grafik 4** : Jumlah tindak penahanan yang dilaporkan, berdasarkan umur dan jenis kelamin, 1974-1999
- 2358 | **Grafik 5** : Tingkat pembunuhan penduduk sipil (per 10.000 orang), berdasarkan umur dan jenis kelamin, 1974-1999
- 2359 | **Grafik 6** : Pelanggaran (pembunuhan) dalam lintas-waktu, 1974-1999
- 2360 | **Grafik 7** : Jumlah tindak penghilangan, berdasarkan umur dan jenis kelamin, 1974-1999

Pelanggaran hak anak

7.8.

Pendahuluan

1. Anak-anak di Timor-Leste mengalami segala jenis pelanggaran hak asasi manusia selama periode mandat Komisi, 25 April 1974-25 Oktober 1999. Penelitian Komisi telah mengungkapkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik politik di Timor-Leste melakukan pelanggaran terhadap anak-anak. Sebagian sangat besar pelanggaran tersebut dilakukan oleh militer Indonesia dan pasukan pembantunya. Mereka melakukan pembunuhan, pelanggaran seksual, penahanan dan penyiksaan, pemindahan paksa, dan perekrutan paksa terhadap anak-anak.
2. Dalam beberapa hal, apa yang dialami oleh anak-anak sama dengan yang dialami orang Timor pada umumnya; mereka menderita karena semua pihak tidak membedakan penduduk sipil dengan petempur. Akibatnya anak-anak tidak dikecualikan ketika terjadi pembantaian massal atau terperangkap bersama keluarganya di garis tembak-menembak ketika terjadi operasi militer. Data yang dikumpulkan oleh Komisi melalui proses pengambilan pernyataan menunjukkan bahwa anak-anak mengalami pelanggaran paling banyak sepanjang 1976-1981 dan pada 1999 yang kurang-lebih mencerminkan pola pelanggaran yang dialami penduduk seluruhnya.
3. Lebih jauh, cara-cara pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak sering sama dengan yang dilakukan terhadap orang dewasa. Kecuali dalam hal usia korban, isi berbagai laporan kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dikemukakan berikut ini hampir tidak berbeda dengan yang diuraikan dalam bab mengenai kekerasan seksual. Laporan-laporan ini menggambarkan tentang:
 - pemerkosaan dan perbudakan seksual di kamp-kamp penampungan;
 - kekerasan seksual pengganti (*proxy violence*) yang ditujukan pada anggota keluarga yang masih di hutan;

- pelanggaran terhadap anak-anak yang terlibat dalam kegiatan klandestin yang dapat berubah menjadi eksploitasi seksual berkepanjangan; dan
- penggunaan secara strategis kekerasan seksual sebagai satu bentuk penyiksaan dan dilakukannya hal ini dengan memanfaatkan kesempatan.

4. Untuk anak-anak, sebagaimana yang terjadi pada orang dewasa, kekerasan seksual dilakukan dengan terbuka tanpa mengkhawatirkan adanya sanksi, oleh semua tingkatan militer dan paramiliter di Timor-Leste serta oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai pihak berwenang sipil seperti para kepala desa.

5. Yang lebih mengaburkan perbedaan pengalaman antara orang dewasa dan anak-anak adalah kenyataan bahwa orang Timor-Leste mempunyai pemahaman yang lebih longgar mengenai masa kanak-kanak dibandingkan definisi internasional yang jelas. Mengikuti berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak, Komisi mengadopsi definisi bahwa anak-anak adalah orang yang berusia 17 tahun atau di bawahnya.*

6. Kalau demikian, mengapa anak-anak dibahas secara khusus dalam Laporan ini?

7. Pertama, pelanggaran terhadap anak-anak dikecam secara universal. Jadi, adanya harapan bahwa semua pihak akan berlaku lebih hormat terhadap anak-anak dibandingkan terhadap orang dewasa, menjadikan pelanggaran terhadap anak-anak dalam skala apapun menjadi sangat mengejutkan. Perasaan bahwa pelanggaran terhadap anak-anak sungguh mengejutkan bersumber dari pemahaman bahwa anak-anak sebagai suatu kelompok adalah kelompok yang murni dan bahwa kemurnian anak-anak harus sebisa mungkin dilindungi dari kejahatan dunia orang dewasa.

8. Kedua, jelas bahwa anak-anak adalah salah satu kelompok paling rentan dalam masyarakat, khususnya dalam situasi konflik dan kekacauan sebagaimana yang dialami Timor-Leste selama 25 tahun mandat Komisi. Seperti diuraikan dalam Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan, anak-anak termasuk dalam orang-orang yang dipindahkan dari rumah mereka setelah terjadinya invasi, sering selama bertahun-tahun lamanya dan merupakan korban utama kelaparan dan penyakit. Banyak anak tak lagi memiliki anggota keluarga yang mendukung mereka dan karenanya rentan terhadap penganiayaan, penculikan, atau perekrutan paksa. Misalnya, penggunaan anak-anak sebagai TBO (Tenaga Bantuan Operasi) membahayakan nyawa, kesehatan, dan masa depan mereka. Fisik mereka yang relatif masih lemah membuat beban berat yang harus mereka bawa semakin besar berkemungkinan merusak kesehatan mereka. Masa tugas yang dapat berlangsung selama beberapa tahun menghapuskan kesempatan mereka memperoleh pendidikan.

* Di Timor-Leste, anak-anak dimengerti sebagai orang yang belum menikah. Oleh karena itu orang yang berusia di bawah 18 tahun yang sudah menikah dianggap sebagai orang dewasa dan orang yang belum menikah dan berusia lebih dari 17 tahun dapat dianggap sebagai anak-anak. Konflik itu sendiri menciptakan kerumitan lebih jauh: misalnya, anak-anak seumur 15 tahun menduduki posisi yang berwenang dalam Falintil dan diperlakukan sebagai orang dewasa; karena kekacauan yang disebabkan oleh perang, banyak pelajar sekolah menengah yang berusia 18 tahun ke atas.

9. Kedudukan khusus anak-anak di Timor-Leste tidak hanya berasal dari pengakuan universal atas keunikan status mereka. Hal ini juga bersumber pada kenyataan bahwa anak-anak adalah perwujudan masa depan. Kedua belah pihak dalam konflik berusaha menanamkan kesetiaan terhadap perjuangan mereka di kalangan anak-anak pada usia dini. Militer Indonesia secara aktif melibatkan anak-anak ke dalam militer dan paramiliter melalui penggunaan mereka sebagai TBO dan milisi. Beberapa di antara anak-anak itu menanjak melalui berbagai posisi menjadi pemimpin milisi utama. Sebagaimana dikemukakan dalam Bab 7.9: Hak Sosial dan Ekonomi, Indonesia dengan terbuka menggunakan sistem pendidikan untuk melakukan propaganda mengenai integrasi dan negara Indonesia kepada anak-anak sejak masa awal pendudukan. Pihak Resistansi melibatkan anak-anak terutama dengan melibatkan mereka dalam peran-peran kecil seperti sebagai kurir dan penjaga. Bagaimanapun, sebagaimana ditunjukkan kisah-kisah berikut ini, hal itu memungkinkan mereka naik tingkat dalam gerakan bawahan. Juga ada alasan praktis untuk melibatkan anak-anak: bagi tentara Indonesia anak-anak lebih mudah ditundukkan atau dipengaruhi daripada orang dewasa. Bagi pihak Resistansi, anak-anak mempunyai keunggulan jarang dicurigai pihak yang berwenang dan memiliki jaringan gereja serta masyarakat yang dapat digunakan untuk perjuangan.

10. Karena kerentanan anak-anak, Komisi percaya bahwa ada trauma yang meluas di kalangan orang Timor-Leste yang dibesarkan dalam masa pendudukan Indonesia. Ada bukti bahwa trauma bisa jadi parah di antara mereka yang direkrut sebagai milisi anak-anak pada 1998 – 1999. Dalam kasus mereka, trauma tersebut bukan hanya terkait dengan paparan terhadap kekerasan luarbiasa, tapi juga karena dampak kejiwaan perekrutan paksa, loyalitas yang terpecah, dan rasa malu karena pada akhirnya berada di pihak yang salah. Yang disampaikan berikut ini merupakan kasus anak-anak lain yang menjadi sasaran tekanan-tekanan yang serupa. Misalnya, anak-anak dijadikan TBO sering karena mereka atau keluarga mereka dicurigai mempunyai hubungan dengan gerakan kemerdekaan. Terdapat ketimpangan luarbiasa dalam hal kekuatan dan sumberdaya antara yang melakukan pendudukan dan yang diduduki. Sama halnya dengan yang terjadi pada seluruh penduduk, batas antara pemaksaan dan kepatuhan tidak pernah jelas. Perlunya menyeimbangkan tekanan yang datang dari berbagai arah ini membuat anak-anak berisiko dinamakan “kepala dua” (bahasa Indonesia) atau *ulun rua* (bahasa Tetum) oleh kedua belah pihak. Tanggapan anak-anak terhadap berbagai tekanan ini dapat berubah seiring waktu sebagai akibat siksaan, ajakan, atau pengalaman pertempuran.

11. Ketiga, anak-anak Timor-Leste mengalami penganiayaan khusus yang berbeda dengan penganiayaan yang dilakukan terhadap penduduk umumnya. Secara khusus, hanya anak-anak, dalam jumlah ribuan, yang dipindahkan secara paksa ke Indonesia. Banyak dari mereka dipindahkan secara paksa, berlawanan dengan keinginan orangtua mereka, dan karena itu tindakan ini merupakan penculikan. Tidak jelas apakah tindakan ini sudah diresmikan dalam suatu kebijakan. Namun, ada banyak bukti bahwa para pejabat tinggi, baik militer maupun sipil, tidak mengatur hal ini dan kadang-kadang mereka sendiri terlibat di dalamnya. Bahkan bila pemindahan tersebut sebagian dimotivasi oleh rasa kemanusiaan, atau bila

dilakukan dengan izin orangtua sang anak, sedikit sekali diambil upaya untuk memastikan agar anak-anak ini tetap dapat berhubungan dengan keluarga mereka. Mereka tidak dapat bebas memilih untuk kembali atau tidak kembali ke Timor-Leste, dan tidak diperbolehkan mempertahankan identitas budaya mereka. Dalam beberapa kasus semua hal semacam itu memang dihambat.

12. Seperti kaum perempuan, anak-anak sering diperlakukan bagaikan barang milik. Misalnya, sebagai TBO, mereka tidak secara teratur dibayar atas jasa yang mereka berikan. Mereka diwajibkan mengangkut barang berat. Mereka dapat dibawa pulang ke Indonesia oleh prajurit yang telah merekrut mereka atau dialihkan kepada prajurit lain. Ikatan mereka dengan keluarga mereka, serta status khusus mereka sebagai anak-anak, umumnya diabaikan.

13. Keempat, status khusus anak-anak diakui hukum internasional dan sebagian besar sistem hukum setempat, termasuk hukum Indonesia. Sebagian besar sistem hukum memberikan pertimbangan khusus pada kebutuhan anak-anak. Sementara dalam situasi konflik bersenjata dan pendudukan, hukum internasional memberikan perlindungan kepada anak-anak yang tidak sama dengan penduduk pada umumnya.

14. Beberapa ketentuan hukum internasional yang relevan berlaku sama untuk semua golongan penduduk. Sebagai contoh, memaksa penduduk sipil untuk turut serta dalam operasi militer melawan negeri mereka sendiri dilarang oleh hukum humaniter¹ dan juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa IV.² Hukum hak asasi manusia menjamin hak orang dewasa maupun anak-anak, termasuk hak hidup, hak memperoleh makanan, serta hak bebas dari penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang. Juga terdapat banyak sekali standar internasional yang mengatur bagaimana anak-anak harus diperlakukan oleh negara, baik dalam situasi konflik bersenjata maupun dalam masa damai.

15. Berdasarkan Konvensi Jenewa IV, Indonesia mempunyai kewajiban terhadap anak-anak Timor-Leste selama konflik. Indonesia diwajibkan untuk:

1. mengupayakan pemindahan anak-anak dari wilayah konflik;³
2. memastikan bahwa jika perlu diadakan evakuasi atau pemindahan penduduk di dalam wilayah pendudukan, anggota dari keluarga yang sama tidak boleh dipisahkan;⁴
3. melakukan tindakan perawatan anak-anak di bawah usia 15 tahun yang menjadi yatim-piatu atau terpisah dari orangtua mereka;⁵
4. melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengidentifikasi anak-anak dan mendaftarkan orangtua mereka.⁶
5. memfasilitasi bekerjanya lembaga-lembaga secara layak untuk kesejahteraan dan pendidikan anak-anak;⁷ dan
6. tidak mengubah status pribadi anak-anak atau mendaftarkan mereka dalam organisasi-organisasi Indonesia.⁸

16. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak pada September 1990, Indonesia menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan hukum hak asasi manusia internasional mengenai anak-anak di Timor-Leste, termasuk untuk:

7. memberikan prioritas pada kebutuhan anak-anak ketika mengambil keputusan yang berhubungan dengan anak-anak;⁹
8. melindungi anak-anak dari kerusakan fisik dan mental, eksploitasi dan penganiayaan seksual, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya;¹⁰
9. menjamin anak-anak dengan standar kehidupan yang layak sesuai dengan perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial;¹¹
10. mengatur proses adopsi dan menjamin bahwa adopsi ditangani oleh otoritas yang berkemampuan sesuai dengan hukum yang berlaku;¹²
11. memerangi pemindahan secara tidak sah anak-anak ke luar negeri dan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak-anak;¹³
12. menyediakan pelayanan khusus bagi anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka, dengan mempertimbangkan latar belakang budaya mereka;¹⁴
13. melakukan tindakan-tindakan untuk mempromosikan pemulihan kejiwaan dan jasmani serta reintegrasi sosial anak-anak yang menjadi korban konflik dan penganiayaan.¹⁵

17. Hukum dalam negeri Indonesia juga berisi ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk melindungi anak-anak. Jadi, selain larangan umum untuk penculikan (Pasal 328) dan perampasan kebebasan pribadi (Pasal 333), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara khusus juga mempidanakan tindakan mengambil anak yang belum cukup umur dari orang yang memiliki wewenang yang sah atas anak tersebut; hukuman penjara untuk tindakan ini lebih berat apabila digunakan tipu-muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan (Pasal 330).

Metode penelitian

18. Komisi telah mengumpulkan bahan dari berbagai sumber untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak.

19. Melalui proses pencarian kebenaran yang mengambil pernyataan dari masyarakat dan memasukkannya ke dalam basis data, diidentifikasi seluruhnya 2.991 korban yang berusia di bawah 18 tahun. Jumlah ini adalah 3,4% dari seluruh jumlah korban yang dilaporkan kepada Komisi melalui proses pengambilan pernyataan. Akan tetapi angka ini tidak mencerminkan proporsi korban anak-anak di Timor-Leste karena pada 73,3% kasus, usia korban tidak disebutkan. Hal ini karena banyak pemberi pernyataan tidak mengetahui usia korban, terutama jika korbannya bukan anggota keluarga dekat. Dalam kasus-kasus yang lain, pemberi pernyataan tidak dapat mengingat usia korban ketika pelanggaran terjadi jauh sebelumnya. Lagi pula, proses pengambilan pernyataan itu sendiri berfokus pada segi naratif ketimbang pada rincian biografis.

20. Komisi juga melakukan lebih daripada 100 wawancara dengan orang-orang yang mengalami pelanggaran sebagai anak-anak atau yang mengetahui tentang perlakuan terhadap anak-anak pada masa pendudukan. Ini secara khusus menjadi penting dalam penyelidikan Komisi mengenai anak-anak yang dibawa ke Indonesia, yang merupakan jenis pelanggaran yang tidak dimasukkan dalam proses pencarian kebenaran statistik yang dilakukan oleh Komisi. Komisi juga menyelenggarakan 257 lokakarya Profil Komunitas di seluruh negeri, yang menyediakan informasi tambahan tentang anak-anak. Perincian pelanggaran hak asasi manusia di setiap komunitas, termasuk yang dialami oleh anak-anak, disampaikan dalam lokakarya-lokakarya tersebut.

21. Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada unit rekonsiliasi komunitas Komisi oleh para pelaku pelanggaran ringan memberi konteks pada penelitian mengenai anak-anak yang terlibat dalam milisi pro-otonomi. Akan tetapi, tujuan dari pernyataan-pernyataan ini adalah memfasilitasi kembalinya pelaku ke komunitas dan bukan pencarian kebenaran, sehingga tidak memberikan informasi yang terperinci tentang topik-topik yang dibahas dalam bab ini.

Anak-anak dalam konflik politik bersenjata dan gerakan klandestin

22. Salah satu cara yang paling langsung melibatkan anak-anak di dalam konflik bersenjata adalah dengan memaksa mereka bergabung dalam angkatan bersenjata atau terlibat dalam berbagai kegiatan militer terkait. Karena secara fisik rentan, lebih mudah dipengaruhi, dan lebih mudah dikendalikan dibandingkan orang dewasa, anak-anak bisa menjadi sumber dukungan yang berharga dalam operasi militer. Tetapi, kerugiannya, baik bagi anak-anak maupun masyarakat pada umumnya, sangat tinggi. Anak-anak kehilangan statusnya sebagai orang sipil dalam konflik bersenjata dan dengan demikian kehilangan hak atas perlindungan dari kekerasan dalam perang yang diberikan hukum humaniter internasional. Selanjutnya, mereka dihadapkan pada bahaya yang luarbiasa dan pada kekerasan sebagai sesuatu yang rutin selama masa perkembangan terpenting dalam hidup mereka. Ini tak jarang mencakup pelanggaran berat hak asasi manusia, baik sebagai korban, pelaku, atau saksi. Penggunaan anak-anak dengan cara ini juga berpengaruh pada militerisasi dan polarisasi masyarakat luas. Hal ini menempatkan anak-anak tidak hanya di garis depan konflik militer, tapi juga di garis depan konflik sosial.

23. Karena alasan-alasan ini, memaksa anak-anak di wilayah pendudukan untuk bekerja dalam atau dengan pasukan bersenjata secara khusus dilarang oleh hukum internasional. Telah dan terus ada pertentangan mengenai usia yang layak bagi anak-anak untuk bergabung dalam militer.

24. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, yang diratifikasi Indonesia pada 1990, berlaku ketentuan-ketentuan berikut ini:

- Negara-negara tidak boleh merekrut anak-anak di bawah usia 15 ke dalam angkatan bersenjata mereka dan harus melakukan langkah-langkah mencegah anak-anak di bawah usia 15 tahun terlibat langsung dalam permusuhan.¹⁶
- Jika merekrut anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata, negara harus memberi prioritas kepada anak-anak yang lebih tua.¹⁷
- Anak-anak memiliki hak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan hak untuk dilindungi dari melakukan pekerjaan yang cenderung merusak atau berbahaya bagi anak-anak.¹⁸

25. Selain itu, Pasal 51 Konvensi Jenewa IV melarang Kekuatan Pendudukan memaksa orang sipil berdinasi dalam angkatan bersenjatanya dan menggunakan propaganda untuk pendaftaran sukarela. Anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan apapun.

26. Dalam proses pengambilan pernyataan, Komisi mendokumentasikan 146 kasus perekrutan anak-anak. Ini merupakan 6,8% (146/2.157) dari semua perekrutan paksa yang didokumentasikan oleh Komisi. Namun, dalam 45,5% (981/2.157) kasus perekrutan, umur korban tidak diketahui. Karena itu, ada kemungkinan bahwa sekitar 981 kasus perekrutan di mana umur korban tidak diketahui sesungguhnya dilakukan terhadap anak-anak.

27. Mayoritas yang sangat besar, 83,6% (122/146), dari kasus perekrutan anak yang terdokumentasi terjadi antara 1975 dan 1983. Karena itu, perekrutan anak-anak tampaknya sebagian besar dilakukan pada masa awal pendudukan Indonesia. Dari kasus-kasus perekrutan anak-anak yang didokumentasikan oleh Komisi, 84,3% (123/146) pelakunya adalah militer Indonesia dan 17,8% (26/256) pelakunya orang Timor-Leste yang bekerja dengan militer Indonesia, termasuk milisi pada 1999. Hanya 3,4% (5/146) dari perekrutan anak-anak yang didokumentasikan Komisi dilakukan oleh gerakan Klandestin atau Falintil.

28. Semua pihak yang terlibat dalam konflik di Timor-Leste menggunakan anak-anak selama periode yang menjadi mandat Komisi. Sebagai TBO, anak-anak menjalankan berbagai tugas. Meskipun tidak selalu terlibat langsung dalam pertempuran, anak-anak TBO sering dibawa ke medan pertempuran dan karenanya berhadapan dengan bahaya fisik. Setidak-tidaknya, mereka hidup dalam kondisi yang sangat sulit dan menjadi mangsa perlakuan sewenang-wenang para prajurit. Anak-anak juga berperan penting dalam Resistansi, baik berperang bagi Angkatan Bersenjata Pembebasan Nasional Timor-Leste (Forças Armadas da Libertação Nacional de Timor-Leste, Falintil) atau sebagai bagian dari gerakan Klandestin.

* Ketika menghitung tanggung jawab proporsional pelanggaran itu, sebagian pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena tanggungjawabnya ada pada beberapa orang pelaku.

Terakhir, anak-anak juga direkrut ke dalam milisi yang meneror Timor-Leste pada 1999. Sering mereka bergabung dalam milisi sebagai akibat dari intimidasi yang sungguh-sungguh telah melanggar hak asasi manusia mereka dan kemudian berlanjut dengan mereka sendiri melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

29. Bagian berikut tidak hanya mengkaji kasus-kasus perekrutan paksa, tetapi juga pengalaman luas anak-anak yang terlibat dalam konflik, baik sebagai TBO untuk militer Indonesia, sebagai milisi pada 1999, atau dalam gerakan Resistansi melalui gerakan Klandestin atau Falintil.

Anak-anak sebagai TBO dan keikutsertaan dalam operasi

30. Bentuk utama keterlibatan anak-anak Timor dengan militer Indonesia adalah sebagai TBO. Militer Indonesia menggunakan orang dewasa dan anak-anak, terutama laki-laki, sebagai TBO segera sesudah invasi, sebagai tenaga pengangkut, pelayan, dan pembantu umum dalam berbagai operasi militer. TBO ditempatkan di dalam kamp-kamp militer tetapi mereka sering menemani tentara ke medan operasi. Tujuan langsung perekrutan TBO adalah menyediakan bantuan logistik operasional. Oleh karena itu, perekrutan dilakukan ketika ada kebutuhan untuk memindahkan perbekalan melalui wilayah yang belum dikenal. Tujuan kedua, menurut berbagai dokumen militer yang diperoleh Komisi, adalah untuk mendorong anak-anak menjadi pendukung integrasi.

31. Bagi anak-anak, ada sebab yang rumit yang membuat mereka menjadi seorang TBO. Banyak yang secara terbuka dipaksa dengan ancaman kekerasan terhadap diri mereka sendiri maupun keluarga mereka. Yang lain menjadi TBO supaya mendapat makanan untuk mempertahankan hidup atau untuk mengamankan keluarga mereka. Hal ini jelas nyata pada akhir dasawarsa 1970-an, ketika makanan sangat langka dan keluarga-keluarga berada dalam keadaan yang rentan. Sebagian anak-anak bergabung justru karena mereka atau keluarga mereka dicurigai sebagai pendukung Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Leste (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, Fretilin). Ada juga yang bergabung secara sukarela.

32. Menurut penelitian Komisi dan sumber-sumber kedua, termasuk berbagai dokumen militer, sebagian besar anak-anak direkrut pada tahun-tahun awal konflik, 1976-1981. Walaupun ada kasus-kasus TBO yang berusia enam tahun,* remaja lelaki kelihatannya merupakan kelompok anak-anak yang paling banyak.¹⁹ Temuan ini sesuai dengan pola-pola statistik yang diperoleh dari proses pengambilan pernyataan Komisi, yang menunjukkan bahwa perekrutan paksa kebanyakan dialami oleh lelaki muda yang berusia antara 19 dan 34 tahun. Di antara anak-anak yang direkrut paksa, hampir semuanya remaja. Masa tugas berkisar antara beberapa minggu hingga lebih daripada satu tahun. Pada sebagian besar kasus, para TBO diberi sertifikat di akhir masa tugas mereka dan dikembalikan ke rumah masing-

* Dalam basis data ada satu kesaksian tangan pertama tentang seorang anak lelaki yang direkrut Batalion Lintas Udara (Linud) 700 ABRI di Ainaro pada 1978 ketika "berusia kurang-lebih 6 tahun" (Pernyataan HRVD 3242). Eurico Guterres juga mengaku mulai bekerja sebagai TBO pada usia enam tahun.

masing, kadang-kadang dalam kelompok-kelompok besar setelah batalion mereka menyelesaikan tugasnya. Juga terdapat kasus-kasus TBO yang dibawa ke Indonesia bersama anggota tentara yang mereka layani, bergabung dengan batalion lain, atau tetap tinggal di Dili.

33. Dari kesaksian para mantan TBO, jelas bahwa mereka ditempatkan dalam bahaya ketika dipaksa membawa amunisi, memandu prajurit-prajurit untuk mencari para pendukung Fretilin di hutan, dan mengambil air serta kayu bakar di wilayah-wilayah pertempuran.

Pola-pola perekrutan TBO

34. Komisi tidak bisa membuat penghitungan statistik secara langsung mengenai TBO karena kasus-kasus TBO didokumentasikan sebagai perekrutan anak-anak dalam proses pengambilan pernyataan. Bagian terbesar kasus-kasus perekrutan anak-anak yang didokumentasikan Komisi terjadi antara 1975 dan 1983, jadi mungkin sekali penggunaan TBO paling sering terjadi di antara tahun-tahun tersebut. Dokumen-dokumen militer dan kasus-kasus individual menunjukkan bahwa TBO terus direkrut pada pertengahan dasawarsa 1980-an, walaupun pada tingkat yang lebih rendah dan ada kasus-kasus terisolir sampai dasawarsa 1990-an.²⁰ Penurunan perekrutan anak-anak dapat dijelaskan dengan terjadinya pengurangan operasi militer dan pengetatan peraturan perekrutan.

35. Segera sesudah periode invasi, batalion-batalion tentara Indonesia merekrut paksa banyak sekali orang dari semua umur untuk membantu mengangkut amunisi dan perbekalan untuk jangka waktu yang singkat. Profil Komunitas mengisyaratkan bahwa perekrutan besar-besaran untuk jangka pendek, termasuk perekrutan anak-anak, terus berlanjut selama Operasi Seroja (1975-1979), untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak antara 1975 sampai 1979.

36. Albino Fernandes, misalnya, melaporkan bahwa ia direkrut paksa di Lebos (Alas, Manufahi) pada September 1978 ketika berumur 15 tahun, bersama dengan semua anak-anak di desa tersebut yang berusia di atas 12 tahun. Ia bertugas selama lebih daripada satu bulan dan melarikan diri sebelum satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di tempatnya bertugas menjalankan rencana untuk mengirimkannya ke wilayah timur untuk bertugas sebagai TBO.* Bonifacio dos Reis menyampaikan bahwa ketika berusia 17 tahun, ia dan banyak orang lain ditangkap dan dipaksa membawa perbekalan militer dari Letefoho (Ermera), ke Hatolia (Ermera) selama tiga hari tiga malam tanpa diberi makanan.²¹ Seorang anak berusia 14 tahun berada di antara sekelompok besar penduduk sipil yang tertangkap dan ditahan di markas Komando Rayon Militer (Koramil) di Maubara (Liquiçá) pada Februari 1977.²² Ia adalah satu dari lima pemuda yang dipaksa menjadi TBO selama satu bulan oleh Batalion 310.

* Wawancara CAVR dengan Albino Fernandes, Alas, Manufahi, 6 Maret 2003 (wawancara 2.1a). Lihat juga pernyataan HRVD 06117, di mana Augusto Guterres mengungkapkan kepada Komisi bahwa pada 1978 di Baguia, Baucau, ia melihat banyak pemuda direkrut menjadi TBO pada waktu ia menyerah.

37. TBO lainnya direkrut secara sendiri-sendiri untuk memberikan bantuan kepada anggota tentara tertentu dan ini merupakan pola yang terus meningkat setelah berakhirnya Operasi Seroja. Para TBO ini tidak hanya membantu mengangkut barang-barang, tetapi juga melakukan pekerjaan rumahtangga atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh anggota tentara yang mereka layani, dan tinggal dengan anggota-anggota tentara di kamp serta menyertai mereka ke medan pertempuran. Hubungan antara prajurit dan TBO-nya cukup dekat secara pribadi sehingga dalam beberapa kasus Komisi mendapat keterangan bahwa seorang TBO menyertai tentara yang didampinginya ke rumah sakit di Dili dengan helikopter setelah anggota tentara itu terluka.²³ Pada mulanya, perekrutan seperti itu dilakukan oleh anggota tentara secara sendiri-sendiri dan sewaktu-waktu. Pada 1982, mungkin bahkan lebih awal, bentuk perekrutan ini diakui dan diatur, dan para anggota tentara yang mencari TBO diharuskan berbicara dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat.²⁴

Status TBO dalam militer

TBO bukanlah bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dalam arti mereka tidak diberi pangkat, seragam, atau gaji. Akan tetapi, TBO diakui sebagai suatu kategori pembantu tersendiri dan dibedakan dari penduduk sipil lainnya yang direkrut untuk operasi-operasi, seperti Operasi Keamanan (yang juga dikenal sebagai Operasi Pagar Betis) yang dilancarkan pada 1981. Faktor-faktor berikut ini menunjukkan bahwa perekrutan TBO merupakan kebijakan resmi militer:

- Berbagai peran dan tugas yang dilakukan TBO sama antara satu batalion dengan yang lainnya dan dalam kurun waktu yang berbeda.
- Walaupun tidak digaji, para TBO umumnya mendapatkan makanan dan tempat tinggal untuk jasa yang mereka berikan.
- Menurut Instruksi Operasi nomor 15, pada 1982 TBO adalah bagian resmi dan tetap dalam struktur militer.²⁵ Setiap Kodim diinstruksikan untuk “menyediakan TBO untuk satuan tempur, pasukan teritorial, dan pasukan kepolisian serta melaksanakan pengawasan dan pengelolaan TBO yang direkrut.”
- Dokumen ini juga memerintahkan kepada kesatuan-kesatuan yang memerlukan TBO untuk mengajukan permintaan kepada Babinsa—anggota militer yang bertugas di tingkat desa—di masing-masing tempat. Walaupun mungkin tidak selalu diikuti, ini menyiratkan bahwa militer memiliki sistem untuk perekrutan TBO dari desa-desa asal mereka.

- Instruksi Operasi nomor 15 juga memberi arahan kepada Kodim untuk menyaring TBO, untuk memberikan pengakuan resmi kepada mereka yang terbunuh, ganti rugi bagi mereka yang terluka, dan penghargaan kepada mereka yang layak menerimanya. Dokumen-dokumen militer lainnya menyebutkan penghargaan untuk keberanian, bahkan kenaikan pangkat anumerta sampai ke pangkat prajurit untuk TBO yang terbunuh dalam pertempuran.
- TBO juga diberi sertifikat yang ditandatangani oleh komandan batalion pada akhir masa tugasnya, terkadang disertai dengan pemberian uang sekadarnya.

38. Cara-cara seleksi TBO sangat berbeda-beda. Wawancara-wawancara penelitian dan pernyataan-pernyataan yang diambil oleh Komisi menunjukkan bahwa pada dasawarsa 1970-an banyak anak direkrut setelah mereka menyerah atau ditangkap oleh pasukan-pasukan yang melakukan serbuan. Yang lainnya dipilih karena mereka dianggap bersimpati pada tujuan Indonesia. Komisi menerima pernyataan seorang pendukung Persatuan Demokratis Timor (União Democrática Timorese, UDT) yang ditahan oleh Fretilin. Tentara Indonesia yang menyerah membebaskannya dan ia menjadi seorang TBO.²⁶ Dalam kasus yang lain, António da Costa mengisahkan bahwa ia berada di antara sejumlah besar TBO yang direkrut oleh pasukan yang mendarat di wilayah Manatuto yang dikenal hanya sedikit dari penduduknya yang mendukung Fretilin, meskipun beberapa di antara mereka adalah anak-anak.²⁷

39. Dalam sedikit kasus, TBO direkrut setelah para anggota lain dari suatu kelompok yang tertangkap dibunuh. Cipriano de Jesus Martins melaporkan bahwa setelah kakak perempuan dan anaknya dibunuh oleh ABRI di Riheu (Ermera, Ermera) pada Januari 1976, ia dipaksa menjadi seorang TBO selama satu tahun.²⁸ Komisi menerima dua pernyataan mengenai satu kejadian dari Eurico de Almeida dan Marcos Gusmão. Mereka menyampaikan bagaimana sekelompok anggota keluarga mereka sedang mencari makan di luar kamp-kamp di Venilale (Baucau) pada 12 Oktober 1979 ketika mereka bertemu dengan tiga peleton dari Batalion 745. Tiga laki-laki dewasa disebutkan ditembak dan terbunuh, tiga anak kecil disuruh pulang, dan satu anak berusia 10 tahun, Manuel de Almeida, direkrut sebagai seorang TBO.²⁹ Dalam kasus ketiga semacam itu, Marcos Loina da Costa mengungkapkan kepada Komisi bahwa ketika berusia 12 tahun di Laleia (Manatuto) ia pergi untuk mencari makanan dan bertemu dengan dua laki-laki yang ternyata adalah mantan anggota Falintil. Mereka ditangkap militer Indonesia dan dibawa ke pos di Larimasa (Laleia, Manatuto). Dua orang itu dibunuh, sedangkan Marcos dipaksa menjadi seorang TBO.³⁰ *

* Agostinho Soares mengisahkan bahwa setelah penangkapan massal di Letefoho (Ermera) banyak orang yang dicurigai sebagai anggota Fretilin atau Falintil dilatih sebagai Ratih atau Hansip, termasuk beberapa orang yang berusia 14 dan 15 tahun. Wawancara CAVR dengan Agostinho Soares, Ermera, 13 Agustus 2003 (wawancara 1.13c).

Jumlah TBO anak-anak

40. Sebagaimana dikemukakan di atas, TBO tidak secara khusus didokumentasikan melalui proses pengambilan pernyataan sehingga Komisi tidak dapat membuat penghitungan statistik langsung tentang TBO. Namun, berbagai sumber lain, termasuk wawancara-wawancara yang dilakukan oleh Komisi, dokumen-dokumen militer, dan Profil Komunitas, menunjukkan bahwa TBO yang direkrut jumlahnya banyak.

41. Perkiraan konservatif mengenai keseluruhan jumlah TBO dapat diambil dari dokumen-dokumen militer. Pada 1982, panduan untuk mobilisasi penduduk sipil membatasi jumlah TBO maksimum 5-7% dari seluruh kekuatan suatu kesatuan, sambil mengakui bahwa pada kenyataannya jumlah mereka umumnya mencapai 10%, yang menunjukkan bahwa sekitar 80 orang TBO bertugas pada setiap batalion. Satu dokumen militer tahun 1984 membatasi jumlah TBO, dengan hanya mengizinkan kesatuan seukuran batalion untuk merekrut 15 TBO saja, atau lima orang per kompi.* Jumlah ini jauh lebih sedikit daripada yang diperkirakan oleh para mantan TBO yang berbicara kepada Komisi.† Jumlah batalion berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jumlah terbanyak adalah pada 1976 dan 1978, sebanyak 30 batalion bertugas di Timor-Leste. Namun tidak jelas apakah semua batalion mempunyai TBO, atau berapa banyak TBO yang bertugas dalam kesempatan yang berbeda, atau apakah TBO “dirotasikan” keluar dari tugas lebih sering daripada batalion tentara, yang tampaknya memang demikian bila dilihat dari lamanya masa tugas seperti yang dijelaskan oleh para mantan TBO. Akan tetapi, kalau diasumsikan bahwa panduan militer Indonesia mengenai perekrutan TBO banyak diikuti dan tidak dilampaui, jelas bahwa penggunaan TBO merupakan praktik yang umum dan luas oleh kesatuan-kesatuan militer Indonesia. Komisi merekomendasikan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk menentukan tingkatan praktik ini.

42. Juga sulit untuk menghitung proporsi TBO yang anak-anak. Bukti yang belum diteliti menunjukkan bahwa sementara anak-anak merupakan minoritas dalam TBO, jumlah keseluruhannya masih sangat besar. Komisi telah menerima laporan mengenai adanya TBO anak-anak di setiap distrik kecuali Oecussi. Akan tetapi, beberapa kesatuan mungkin merekrut sedikit saja atau tidak samasekali, sementara kesatuan lainnya merekrut banyak pemuda sebagai pembawa barang selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bertahun-tahun. Seorang narasumber mengingat

* Satu batalion terdiri atas sekitar 800 prajurit yang biasanya dibagi dalam lima kompi, masing-masing kompi terdiri atas lima peleton, selanjutnya masing-masing peleton yang terdiri atas 30 prajurit itu dibagi menjadi tiga regu.

† João Rui menyampaikan bahwa setelah Batalion 121 meninggalkan Timor-Leste pada 1980, 200-300 TBO yang telah bertugas pada batalion tersebut dipulangkan dengan kapal laut dari Dili ke kampung halaman masing-masing di distrik-distrik bagian timur, yang menunjukkan bahwa sampai dengan 40% dari batalion tersebut adalah TBO. [Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, Mei 2004.] Sumber yang lain mengungkapkan bahwa menurut pengalamannya satu peleton yang terdiri atas sekitar 30 prajurit mempunyai 10-15 TBO, atau satu untuk setiap dua prajurit. [Wawancara CAVR dengan Alfredo Alves, Dili, 5 Maret 2004.] Namun, Albino Fernandes mengisahkan bahwa pada 1978 di dalam batalionnya, setiap kompi (terdiri atas sekitar 150 orang) seluruhnya mempunyai sekitar 10 TBO. Dengan demikian ada perbedaan yang besar mengenai jumlah TBO dalam satu batalion. [Wawancara CAVR dengan Albino Fernandes, Alas, Manufahi, 6 Maret 2003.]

bahwa dalam suatu kelompok yang terdiri atas 200-300 TBO yang bertugas pada Batalion 121, terdapat kira-kira tujuh anak yang usianya kurang dari 10 tahun dalam kelompok itu termasuk dirinya sendiri. Ia memperkirakan terdapat kurang daripada 30 orang anak berusia 12-13 tahun dan sampai 60 anak yang berusia 14-17 tahun, yang ia anggap bukan anak-anak lagi. Jika dijumlahkan, sekitar setengah hingga sepertiga dari TBO dalam batalion ini berusia di bawah 18 tahun.³¹ Sejalan dengan angka-angka ini, seorang mantan TBO lain melaporkan bahwa berdasarkan pengalamannya, satu peleton yang terdiri atas sekitar 30 prajurit mempunyai 10-15 TBO dan dalam peletonnya ada tujuh anak-anak. Jumlah itu termasuk dua anak kecil yang diambil pada saat operasi dan tidak mempunyai tugas pekerjaan.³² Namun, seorang lain yang pernah menjadi TBO pada 1976 mengingat bahwa dalam batalion hanya ada 18 TBO anak-anak.³³

Mengapa ABRI merekrut anak-anak sebagai TBO?

43. Tujuan utama perekrutan TBO tampaknya bersifat operasional: mengangkut perbekalan dan menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota tentara. Dalam beberapa kasus TBO digunakan untuk memandu tentara, membantu menemukan penduduk sipil maupun gerilyawan di hutan-hutan, atau untuk membawa amunisi, perlengkapan, dan perbekalan selama pertempuran. Juga ada laporan-laporan tentang TBO yang ditugaskan mendahului kesatuan di medan pertempuran.

44. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa anak-anak dan pemuda yang dipilih untuk ini. Ada beberapa kemungkinan: adanya kebutuhan umum tenaga kerja tanpa bayaran, taktik mengambil hati penduduk, atau suatu anggapan bahwa TBO yang masih muda lebih kecil kemungkinannya untuk berkhianat atau melarikan diri.

45. Ada bukti bahwa perekrutan pemuda didorong oleh keperluan memenuhi kebutuhan besar militer akan tenaga kerja tanpa bayaran yang bekerja sebagai pembantu. Hal ini paling besar kemungkinannya pada tahun-tahun awal sesudah invasi, ketika TBO dalam jumlah yang besar direkrut untuk tugas jangka pendek dan sementara. Seorang narasumber mengungkapkan adanya anak-anak penduduk setempat berumur 11 tahun dipaksa bertugas menggantikan sejumlah TBO dewasa yang melarikan diri, karena anak-anak lebih mudah didapat atau mungkin mereka lebih disukai karena lebih mudah dikontrol dibandingkan orang dewasa.³⁴

46. Ada bukti bahwa begitu seorang tentara bertugas merekrut TBO, maka anak-anak secara khusus dijadikan sasaran. Satu dokumen militer tahun 1982 memerinci peran berbagai kelompok paramiliter sipil khususnya yang berhubungan dengan Operasi Kikis (lihat bagian di bawah berjudul Anak-anak dalam operasi: Operasi Keamanan, paragraf 87 - 96). Dalam suatu bagian, dokumen tersebut menyebutkan keunggulan dan kelemahan TBO. Keunggulannya, yang berasal dari pengalaman menjalani banyak waktu bersama anggota tentara Indonesia, mencakup kemampuan berbahasa Indonesia, kesehatan yang baik, dan setia kepada prajurit yang mereka layani. Yang paling penting dalam kaitannya dengan bab ini adalah keunggulan terakhir yang disebutkan, yaitu "usia yang relatif muda, antara 12-35 tahun", walaupun kalimat tersebut tidak menjelaskan mengapa usia muda dianggap sebagai keunggulan.³⁵

47. Dapat dianggap bahwa anak-anak lebih mudah dipengaruhi secara ideologis daripada orang dewasa dan karena itu akan terus mendukung Indonesia. Ada beberapa kasus di mana anak-anak yang bertugas sebagai TBO kemudian bergabung dengan paramiliter atau bahkan dengan militer Indonesia setelah dewasa.* Petunjuk tahun 1982 untuk Babinsa menyebutkan tentang para mantan TBO:

Mereka yang masih dalam usia sekolah harus didorong kembali ke sekolah, sementara mereka yang memenuhi kriteria dan berusia antara 18 dan 25 tahun dapat menjadi anggota kesatuan Ratih[†] dan kemudian anggota ABRI.[‡]

48. Para pemimpin milisi 1999 yang pernah menjadi TBO antara lain adalah Joanico Cesario Belo dari milisi Tim Saka, Cancio Lopes de Carvalho dari milisi Mahidi (Mati Hidup Integrasi dengan Indonesia), dan Eurico Guterres dari milisi Aitarak (kata bahasa Tetum untuk “duri”).³⁶

49. Sebagian anak direkrut paksa sebagai TBO karena dicurigai atau memang berhubungan dengan Fretilin dan karena itu perekrutan ini merupakan usaha mengontrol mereka. Menurut Pastor Locatelli, perekrutan TBO juga merupakan satu strategi militer untuk mencegah pemuda terlibat dalam Fretilin.³⁷ Orang dewasa, termasuk anggota Falintil, sering juga dipaksa menjadi anggota Hansip, Ratih, Wanra, atau anggota paramiliter yang lain.

50. Yang terakhir, anak-anak mungkin lebih disukai dibandingkan orang dewasa karena lebih kecil kemungkinan mereka akan lari atau mengkhianati kesatuannya. Seorang mantan TBO mengatakan kepada Komisi bahwa dari tiga orang TBO di kesatuannya, seorang dewasa melarikan diri pada suatu malam bersama dengan para TBO dari kesatuan lain, sedangkan ia dan seorang TBO yang juga di bawah umur tidak tahu jalan pulang dan karena itu takut melarikan diri.³⁸ Namun, seperti yang tercantum dalam bagian 7.8.2.2, anak-anak dalam jaringan klandestin, pada kenyataannya anak-anak memainkan peran penting dalam tugas intelijen dan dalam menyediakan perbekalan bagi Resistansi,

* Lihat CAVR, *Children and Conflict*, Submisi kepada CAVR oleh Helene van Klinken. *Case Summary Collection*, 2003. Lihat juga CAVR, Profil Komunitas mengenai *aldeia* Vaviquinia, subdistrik Maubara, Liquiçá, 3 Juli 2003, yang mencatat bahwa 12 orang penduduk desa yang tidak diketahui usianya ditangkap Yonif 403 dan 401 dan Kopassandha pada 1976. Mereka dipaksa menjadi TBO dan kemudian direkrut menjadi Hansip pada akhir tugas mereka.

† Penduduk sipil Indonesia secara berkala dipilih untuk menjalani latihan dasar militer dan setelah itu mereka disebut sebagai Rakyat Terlatih (Ratih). Seleksi selanjutnya bisa dilakukan terhadap anggota Ratih untuk membentuk (a) Hansip (Pertahanan Sipil) yang bertanggung jawab melindungi penduduk kalau terjadi bencana alam atau perang, dan (b) Kamra (Keamanan Rakyat).

‡ ABRI, “Petunjuk Teknis tentang Kegiatan Babinsa,” Juknis 06/IV/1982 Korem 164 Wira Dharma, Seksi Intelijen, Willem da Costa (Kepala Seksi Intelijen), diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam Carmel Budiardjo dan Liem Sioe Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, 1984, halaman 201; lihat juga ABRI, Komando Pelaksana Operasi Timor Timur, *Rencana Operasi No. 01/Bayu*, Lampiran D (Rencana Teritorial), halaman 5, yang memerintahkan pasukan-pasukan untuk, “menempatkan TBO dari batalion yang kembali untuk memperkuat Wanra di PPT [Pangkal Perlawanan Taktis].”

dan ada beberapa kasus TBO anak-anak terbunuh atau hilang karena mereka dicurigai berkomunikasi dengan Falintil.⁷

51. Beberapa dokumen militer tahun 1982 memang memperingatkan bahwa pengetahuan yang didapat oleh TBO dapat dengan mudah jatuh ke tangan yang salah. Satu dokumen memperingatkan:

Akibat mengikuti anggota ABRI, mereka akan banyak mengetahui kelebihan maupun kekurangan anggota ABRI. Bila tidak dibina, maka mereka dapat berbalik menyampaikan informasi kepada GPK untuk dimanfaatkan. Beberapa kasus membuktikan bahwa GPK mengirimkan rakyatnya untuk menjadi TBO, dan selanjutnya kembali ke hutan membawa perlengkapan, logistik, dan, yang terpenting, informasi.³⁹

52. Dokumen lain memperingatkan bahwa GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) "...dapat juga menyamar atau menyelundupkan diri ke dalam posisi sebagai tenaga bantuan operasi (TBO) yang ada pada kesatuan-kesatuan ABRI".⁴⁰ Untuk mencegah risiko ini, dokumen lain dari tahun 1982 memberikan petunjuk kepada para Babinsa mengenai bagaimana menangani para mantan TBO: "Berikan mereka tuntunan yang terus-menerus agar mereka tidak terpengaruh GPK."⁴¹

Alasan bergabung

53. Penelitian Komisi menunjukkan bahwa TBO direkrut dengan berbagai cara yang berbeda-beda bergantung pada individu dan situasi sosial-ekonomi serta militer yang lebih luas.

54. Dalam banyak kasus perekrutan anak-anak dilakukan secara paksa, tetapi anak-anak lain memilih bergabung karena keuntungan material atau keamanan, dan lainnya lagi karena mereka menyukai pekerjaannya. João Rui, yang empat kali bertugas sebagai TBO sewaktu masih kanak-kanak, menjelaskan alasannya bergabung terus-menerus: pertama kali bergabung karena ia dipaksa; bergabung yang kedua karena ia tertarik janji akan diberi makanan, permen, dan memperoleh banyak teman; ketiga dan keempat ia sukarela bergabung karena telah terbiasa dengan pekerjaannya dan tidak menyukai pekerjaan berat di ladang yang ia lakukan bersama dengan pamannya di desa. Ia juga berharap bisa memperoleh pendidikan, meskipun hal itu tidak pernah terjadi.⁴²

* Lihat Pernyataan HRVD 04435, di mana João Pinto menguraikan pembunuhan anaknya, Domingos Mário, seorang TBO berusia 17 tahun yang direkrut paksa pada tanggal 4 Desember 1979 oleh Koramil di Luro (Lautém). Setelah ABRI mengetahui bahwa ia telah menulis surat kepada seorang anggota Falintil di hutan selama empat bulan, Domingos dibawa oleh pasukan ABRI Batalion 305 ke Nundelarin, Luro, di mana ia dipukuli, dadanya ditusuk dengan bayonet, dan pipinya disundut rokok. Setelah ditahan selama sembilan hari ia kembali ke rumah selama tiga hari. Seorang Hansip yang bernama Pedro bersama dengan ABRI kemudian datang dan membawa Domingos ke Koramil Luro (Lautém) dan ia tidak pernah kembali.

Pemaksaan

55. José Pinto, yang pada 1977 berusia 16 tahun, menjadi TBO untuk Yonif 724 mengatakan:

Ketika mereka memasuki rumah, [tentara Indonesia] selalu membawa senjatanya. Jadi, apapun kemauan mereka selalu dituruti orangtua saya. Kita tidak bisa mengatakan kita mau atau tidak.⁴³

56. Seperti kesaksian di atas, dalam banyak kasus, anak-anak secara terang-terangan dipaksa menjadi TBO, misalnya setelah tertangkap atau menyerah. Domingos Maria Bada mengisahkan kepada Komisi bahwa setelah bertahun-tahun di gunung, ia dan keluarganya ditangkap anggota tentara dan Hansip di Faturasa (Remexio, Aileu). Sementara seluruh keluarganya dibawa ke kota Remexio (Aileu), ia dan seorang temannya ditahan sebagai TBO di pos militer terdekat di Faturasa. Domingos menjelaskan bahwa ia tidak mau menjadi TBO tetapi diancam dengan sepucuk senjata sehingga tidak punya pilihan lain. Ia bergabung dengan tentara dan diperintahkan membawa ransel mereka ke medan tempur.⁴⁴

57. Tindakan pemaksaan dilakukan terhadap orang yang dicurigai mendukung Fretilin. Misalnya, Luis Soares melaporkan kepada Komisi bahwa ketika ia berusia 16 tahun, ia ditangkap pada 1976 oleh seorang Hansip di Ermera dan diserahkan kepada Yonif 412, karena ia telah membantu Falintil. Ia dipaksa bertugas sebagai TBO di Aileu dan Same selama satu tahun.⁴⁵ Profil Komunitas Aidabaleten (Atabae, Bobonaro) menyebutkan bahwa dalam waktu satu tahun sekitar 300 pemuda yang dianggap sebagai anggota pasukan tombak (*Armas Brancas*)^{*} atau milisi Fretilin ditangkap dan ditahan selama tiga bulan. Setelah dibebaskan, yang masih remaja dipaksa menjalani pelatihan militer dan kemudian dijadikan TBO.

58. Pemaksaan juga terjadi dalam konteks yang lebih luas, yaitu kontrol militer atas penduduk sipil. Seorang mantan TBO menjelaskan:

Tidak ada orang sipil yang bisa melawan tentara. Orang-orang ketakutan. Bahkan seorang bupati tidak berani melawan tentara... Tidak bergabung itu berbahaya—kami akan mati, tidak masalah.⁴⁶

59. Pendekatan persuasif digunakan terhadap Oscar Ramos Ximenes, yang menjadi seorang TBO ketika berusia 12 tahun pada 1980 di Cairui (Laleia, Manatuto):

Saya tidak dapat bersekolah karena lapar, jadi saya menyerahkan diri saya untuk dijadikan TBO, semata-mata agar dapat bertahan hidup.⁴⁷

.....
^{*} *Armas Brancas* adalah istilah tidak resmi untuk pasukan sipil yang bertugas membantu pasukan Falintil dengan menyediakan makanan dan perbekalan lain di medan perang. Pasukan *Armas Brancas* bersenjata pedang, tombak atau panah dan busur tetapi hanya untuk membela diri mereka. Mereka tidak terlibat dalam pertempuran langsung.

60. Militer Indonesia juga menggunakan berbagai metode yang lebih lunak dalam merekrut anak laki-laki dan orang muda untuk bekerja sebagai TBO.

61. Gil Parada Martins Belo menyampaikan kepada Komisi bahwa ketika ia menyerah pada 1979 dan mulai tinggal di Lacluta (Viqueque), militer Indonesia mendekatinya secara teratur dan mengajaknya menjadi seorang TBO, meskipun usianya baru 10 tahun pada waktu itu:

Mereka selalu membujuk saya, itulah sebabnya saya pergi [bersama mereka]. Mereka memberi saya kue, pakaian, celana. Mereka tidak mengancam. Tetapi saya merasa tidak enak karena tentara selalu datang dan memanggil saya. Mereka selalu menunggu ayah saya, sehingga saya akhirnya pergi...Waktu itu makanan sulit. Banyak orang yang meninggal. Ini membuat saya berpikir lebih baik saya mengikuti mereka.⁴⁸

62. Dalam otobiografinya, Eurico Guterres menulis bahwa ia menjadi TBO untuk bertahan hidup:

Meski usiaku ketika itu baru 6 tahun, tapi aku juga ikut bekerja membantu-bantu pasukan TBO pada base camp Batalion 502 di Burkaila [Uatolari, Viqueque]. Meski pekerjaan sebagai TBO dipandang hina, tapi aku harus menekuninya demi meringankan beban ibu. Dengan menjadi TBO, paling tidak aku makan.⁴⁹

63. Ketika berada di kamp, janji akan diberi makanan tambahan memungkinkan para TBO membantu memberi makan keluarga. Agustinho Soares melaporkan bahwa meskipun TBO biasanya hanya menerima sisa makanan tentara, pada waktu itu ia dapat memberikan makanan kepada keluarganya: “Kalau saya tidak jadi TBO, keluarga kami bisa mati semua. Ya kami dapat sedikit rezeki karena saya TBO.”⁵⁰

64. Karena keuntungan material yang bisa didapatkan dari menjadi seorang TBO, juga ada kasus-kasus keluarga mendorong anak-anak mereka untuk bergabung. Setelah tiga tahun berada di gunung-gunung, José Viegas dan keluarganya menyerah pada 1978. Meskipun memiliki latar belakang Fretilin yang kuat, keluarga memaksanya untuk menjadi seorang TBO:

Kebanyakan orang mengetahui bahwa ayah saya dulunya bersenjata, ibu saya seorang delegada [pengurus lokal Fretilin], dan saya sebagai estafeta [penghubung]. Pada 1978 dan selanjutnya, gerak-gerik kami sekeluarga selalu diawasi dan dipantau. Jadi sangat sulit bagi ayah untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berkebun pun tidak bisa! Sebagai jalan keluarnya, ibu meminta saya: “Kamu masuk TBO agar kita dapat makanan dari ‘bapak’ [ABRI].” Namun saya tidak mau walaupun ibu bersikeras sehingga memukul saya. Saya menghindar dari rumah dan berkeliaran di hutan selama satu minggu.⁵¹

Tugas

65. Satu dokumen militer tahun 1984 menyebutkan bahwa TBO bisa ditugaskan sebagai penunjuk jalan hanya di sekitar daerah tempat tinggalnya dan hanya dengan sepengetahuan komando teritorial setempat.⁵² Tetapi, tampaknya ini bukan praktik yang umum. Keterangan yang diperoleh Komisi dari para mantan TBO menunjukkan bahwa tugas TBO bermacam-macam dan tugas ini sering termasuk harus berpindah-pindah mengikuti tentara ke mana pun operasi dilaksanakan.^{*}

66. Banyak TBO digunakan untuk keperluan logistik dalam operasi seperti membawa perbekalan tentara atau ransel seorang tentara yang berisi perlengkapan yang dibutuhkan di medan tempur.⁵³ Di markas, TBO digunakan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan mencari air serta kayu bakar. José Pinto melaporkan bahwa dirinya menjadi TBO selama empat bulan ketika masih berusia 16 tahun. Ia mengambil air dari sumur 10-20 kali sehari menggunakan timba yang menampung 15 liter air. Karena pada waktu itu masih bersekolah, ia mengambil air setiap pagi dan sore hari. Jika pos tentara berada di atas gunung, ia harus berjalan lebih daripada 100 meter naik-turun membawa air.⁵⁴

67. TBO juga digunakan sebagai penunjuk jalan atau pemandu, yang dapat melibatkan mereka dalam tugas-tugas berbahaya seperti membuka jalan bagi tentara untuk memastikan apakah jalannya aman.[†] Pernyataan-pernyataan yang diterima oleh Komisi mengindikasikan bahwa peranan penunjuk jalan sering dikaitkan dengan peran sebagai penghubung ABRI untuk melakukan kontak dengan anggota Resistansi atau menyerahkan kepada mereka yang tinggal di hutan untuk menyerah. Domingos Maria Bada, yang bertugas sebagai TBO selama delapan bulan untuk empat anggota Batalion 410, menyampaikan berbagai pengalamannya selama operasi di Fahinehan dan Turiscaí di Distrik Manufahi:

Tetapi ada satu hal yang penting, bahwa ketika mengadakan operasi di hutan, TBO harus di garis depan, sebagai pembuka jalan untuk tentara, dan TBO harus pergi mencari dan memanggil penduduk yang masih berada di hutan untuk menyerahkan diri.⁵⁵

68. Belchior Francisco Bento Alves Pereira dalam kesaksiannya pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, mengungkapkan tugasnya sebagai seorang TBO pada 1990 di Manutasi (Ainaro, Ainaro) sesudah ia ditahan karena terlibat kegiatan bawahanah:

^{*} Misalnya, Mário dos Santos mengisahkan tentang perjalanan dengan militer dari kampung halamannya di Bazartete (Liquiçá) ke Fatulia (Ermera), kemudian ke Dili dan Ainaro, selanjutnya kembali ke Bazartete selama sembilan bulan (Tim Penelitian Anak dan Konflik CAVR, Makalah Penelitian, "Perekrutasi Paksa," 31 Agustus 2003); Albino Fernandes mengungkapkan bahwa para TBO dari Lebos (Bobonaro) melakukan perjalanan pada 1978 melalui gunung-gunung di kawasan Bobonaro, Ainaro, dan Manufahi (wawancara CAVR dengan Albino Fernandes, Manufahi, 6 Maret 2003).

[†] Lihat pernyataan dari Leoneto Martins, yang diharuskan berjalan di depan pasukan waktu ia bekerja sebagai TBO untuk Yonif 410. Wawancara CAVR dengan Leoneto Martins, Saburia, Aileu, 15 Oktober 2003.

Kalau kami melakukan operasi di hutan, saya disuruh membawa ransel dan perlengkapan perang seperti peluru. Tentara memberi saya pakaian tentara yang baru dan saya menjadi umpan mereka di hutan. Pertama kali saya tinggal bersama Yonif 613, Yonif 641, dan Yonif 642, terakhir dengan Yonif 643.⁵⁶

69. Komisi juga telah mendapatkan kesaksian bahwa TBO dipaksa membantu ketika terjadi pertempuran. Alfredo Alves memberikan kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik bahwa pada usia 11 tahun ia menyertai Batalion 725 ke pertempuran, terutama untuk mengisi ulang magasin.⁵⁷

Kondisi dan perlakuan

70. Meskipun dalam banyak kasus TBO menerima lebih banyak makanan daripada rata-rata penduduk, kondisi mereka juga bisa sulit. Apabila beruntung, mereka diharapkan untuk hidup dalam kondisi keras yang juga dialami para prajurit yang mereka layani, sementara para prajurit tersebut telah terlatih untuk menghadapi keadaan serba-kekurangan. Para mantan TBO menyatakan bahwa mereka menderita kelelahan, kelaparan, dan kehausan. Beberapa mantan TBO mengungkapkan bahwa mereka hanya makan apa yang tersisa dari makanan para prajurit atau dalam beberapa kejadian mereka makan nasi basi.⁵⁷ Jika pengiriman perbekalan dengan helikopter tertunda, kekurangan makanan dialami semua orang. Tetapi, ketika perbekalan tiba, para TBO harus mengangkut beban berat, sering pada jarak yang jauh. Alfredo Alves mengatakan kepada Komisi bahwa semua TBO dalam batalionnya pernah dua kali diberi suntikan di kaki sebelum membawa beban yang berat, agar mereka tidak merasakan beban berat ataupun merasa lelah.

71. Marcos Loina da Costa dari Cairui (Laleia, Manatuto), yang baru berusia 12 ketika dipaksa menjadi TBO, mengatakan bahwa ia merasa kesulitan membawa beban yang berat:

Selama perjalanan terasa kita hampir mati saja, karena bawaan yang berat dan banyak. Barang siapa yang tidak kuat lagi membawa bawaannya, dia akan ditinggalkan begitu saja.⁵⁸

72. Domingas Freitas menceritakan mengenai adik laki-lakinya, Rai Ano, yang direkrut bersama dengan seorang teman bernama Zeca oleh seorang anggota Yonif 744 pada 1978 di Ossu (Viqueque). Zeca kemudian mengatakan kepada keluarga Rai Ano bahwa Rai Ano telah meninggal di Uatolari (Viqueque) karena ia tidak cukup kuat membawa perlengkapan militer yang berat.⁵⁹

73. Perlakuan terhadap TBO oleh militer, yang mencakup penganiayaan fisik, agaknya tergantung pada kepribadian prajurit yang dilayani TBO.

.....
* Lihat juga Pernyataan HRVD 09081 oleh Cipriano de Jesus Martins: "Selama menjadi TBO, saya dipaksa membawa perlengkapan perang seperti peluru dan makanan ke medan pertempuran antara TNI dan Falintil."

Kehidupan sehari-hari seorang TBO

“Kalau kita mati, tidak masalah”

Seorang anak laki-laki direkrut tentara dari Yonif 121, yang memberikannya gula-gula dan menyuruhnya membawa ransel sejauh beberapa kilometer. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, hari sudah gelap dan ia takut pulang. Mereka membawanya ke hutan, di mana ia mengumpulkan kayu bakar dan air, mendirikan tenda, dan memasak:

Kami berjalan lebih daripada 12 jam setiap hari. Berangkat pukul 5 pagi dan berjalan sampai pukul 12.00, kemudian istirahat dan makan siang, lalu kami berangkat lagi sampai malam hari. Besoknya berangkat lagi dan kami mondar-mandir di hutan begitu saja. Saya sudah mulai bawa barang berat pada waktu itu...Lalu kami naik ke [Gunung] Matebian, hujan terus dan saya tidak bisa tidur karena semuanya basah. Kadang-kadang kami kembali ke kota dan mengambil beras, kadang-kadang heli yang antar. Tentara tersebut kemudian mengirim tanda-tanda asap atau memakai radio. Mereka memberi kami makanan dan susu. Kami mondar-mandir di Matebian selama dua bulan. Saya kira kami mau ke kota lagi tetapi ternyata tidak—kami tidak pergi ke kota, kami hanya ada dalam hutan terus.

Ada suatu gunung yang sulit sekali kami lewati dan ada yang jatuh... di perbatasan Uatolari, di kaki gunung tersebut, kami istirahat dua hari, tetapi hujan lebat dan helikopter tidak dapat mencapai daerah kami selama dua hari dua malam. Kami kehabisan beras, rokok, pokoknya semua habis. Mereka tertekan dan hanya meminum teh... Ketika matahari sudah turun, kami mencari buah-buahan, kelapa, dan sebagainya dan tiba-tiba helikopter turun. Tentara sudah mengirimkan isyarat asap dan helikopter itu menjumpai kami dan memberikan beras. Tiba-tiba saja semua TBO yang lebih tua, melarikan diri. Mereka sudah sudah tahu jalan dan kembali ke desa mereka. Sesuatu yang sulit kami [anak-anak kecil] lakukan—kami di tengah hutan dan dari mana kami mengetahui jalan? Malam itu ketika komandan kompi memerintahkan kami untuk mengambil beras, baru diketahui kalau ada dua TBO yang hilang. Satu TBO lainnya juga meninggalkan kesatuan kami, sehingga yang tinggal hanya dua. TBO yang lain itu berumur 16 atau 17, dan saya sendiri berumur delapan atau sembilan.

Esok harinya kami berjalan lagi. Ada banyak beras dan karung juga basah semua...Biasanya kalau kami tinggal di suatu tempat, kami menerima beras dua kali seminggu. Namun ketika kami berjalan itu, kami menerima perbekalan mungkin sekali seminggu...Untuk sembilan orang, itu semua merupakan jumlah beras yang sangat banyak.

Ada kurang lebih 50 kilogram dalam beberapa karung...Jadi kami membawa semuanya dan karena tidak ada banyak TBO sehingga di Uatolari (Viqueque) kami meminta banyak orang lain untuk bergabung. Ada beberapa yang lebih tua, saya melihat malah ada yang diminta membawa peluru. Wilayah itu masih rawan dan sebagian orang yang kami ajak, takut untuk bergabung dengan kami. Kami juga kurang berhati-hati, kalau saja kami mati, tidak masalah. Ada sekitar 10 orang yang bergabung, termasuk anak berusia 11 tahun. Kami berjalan langsung dari sana menuju hutan dan mendaki Matebian lagi. Beberapa TBO yang lebih besar kadang-kadang jengkel karena ransel yang mereka bawa sangat berat dan masih harus membawa peluru. Kami sampai di sungai yang disebut Uaibobo (Ossu, Viqueque) dan mereka menjadi demikian jengkel sehingga membuang semuanya ke dalam sungai... Kami diperintahkan mendaki dan memasuki hutan dan kami tinggal di wilayah perbatasan antara Venilale (Baucau) dan Ossu (Viqueque) dekat sungai. Kami di sana mungkin sekitar enam bulan atau lebih... Kami kemudian pindah lagi ke suatu kota, yang kelihatannya lebih enak, tetapi kami harus bekerja setiap hari: memasak, mengumpulkan air, dan mencuci pakaian.⁶⁰

Jumlah korban

74. Sumber-sumber kualitatif, seperti wawancara dan profil komunitas, menunjukkan bahwa banyak TBO, termasuk anak-anak, mungkin sudah terbunuh dalam pertempuran. Namun demikian, diperlukan pengumpulan dan penelitian data yang lebih terfokus agar bisa diperoleh temuan tentang hal ini.

75. Kesaksian-kesaksian yang diterima oleh Komisi juga mengisyaratkan tingginya jumlah korban meninggal dunia. Seorang TBO yang mulai bertugas pada 1976 dan menghabiskan waktu dengan tiga batalion yang berbeda dalam kurun waktu dua tahun, akhirnya melarikan diri dengan beberapa TBO yang lain karena tingginya jumlah korban meninggal dunia di berbagai distrik bagian timur:

Ketika ada operasi di hutan, kami selalu berada di garis depan. Karenanya ada TBO yang ditembak Fretilin sebab mereka digunakan sebagai penunjuk jalan setiap kali ada operasi. Dari sembilan TBO, tiga orang tewas dan lainnya terluka. Teman TBO saya terluka atau tewas hanya karena mereka selalu disuruh tentara untuk berjalan di garis depan.⁶¹

76. Evaristo da Costa melaporkan kepada Komisi bahwa pada 1983, sembilan anak lelaki, termasuk Aureliano da Silva (10 tahun), Bonifacio da Silva (10 tahun), Domingos Mendonça (11 tahun), Ernesto Amaral (14 tahun), Jacinto Amaral (14 tahun), dan Domingos Mesquita (14 tahun), dipaksa oleh Yonif 514 mengangkut

kantong-kantong penuh berisi beras dari Suco Liurai (Remexio, Aileu) ke Hera (Dili). Ketika mereka tiba di Ailibur/Pamketaudun, Ernesto Amaral disebutkan ditembak oleh seorang prajurit tentara Indonesia bernama C2 karena tidak bisa membawa kantongnya lebih jauh lagi. Anak-anak yang lain melarikan diri ke Dili atau ke desa asal mereka, tetapi para anggota ABRI pergi mencari mereka ke tempat-tempat itu, yang baru berakhir ketika seorang anggota tentara dari Koramil Remexio menghentikan pengejaran tersebut.⁶²

77. Komisi juga mendapatkan laporan tentang kasus TBO anak yang tidak pernah kelihatan lagi sesudah direkrut. Dalam suatu kasus, Apolinario Soares melaporkan bahwa adiknya, João Soares, berusia 10 tahun ketika ditangkap oleh Yonif 745 dan dipaksa menjadi TBO pada 1980, karena keluarganya dicurigai sebagai pendukung Fretilin.⁶³ Dalam kasus lain, Costavo da Costa Ximenes menyampaikan kepada Komisi bahwa adiknya, Avelino Pinto yang juga berusia sepuluh tahun, dibawa ABRI pada 1982, dari rumahnya di Alaua Atas (Baguia, Baucau). Seakan-akan ia hendak diadopsi namun sebenarnya Avelino Pinto dijadikan TBO dan tidak pernah kelihatan lagi sejak itu.⁶⁴ Seorang lelaki dari Atsabe (Ermera), Eduardo Casimiro, mengingat beberapa anak dari wilayah itu meninggal dunia sesudah direkrut sebagai TBO.⁶⁵

78. Sejumlah anak mungkin tewas dalam pertempuran, tetapi Komisi juga menerima laporan mengenai beberapa kejadian TBO dibunuh atau diancam dibunuh oleh militer Indonesia. Alfredo Alves mengenang pembunuhan seorang TBO oleh Batalion 725 di Fatubolu (Maubisse, Ainaro) pada 1977:

Suatu hari, salah satu TBO menolak menambah barang yang dibawanya, yang mengakibatkan kemarahan komandannya. Sesampainya di kamp, semua tentara dan TBO dikumpulkan dan komandan berkata: "TBO tidak boleh menolak membawa barang karena tentara datang membantu dan memberikan kemerdekaan." Kemudian, TBO itu dipanggil ke depan dan ditembak mati. Lalu kami diperingatkan dengan tegas bahwa jika ada yang menolak [menjalankan perintahnya], nasibnya akan sama.⁶⁶

79. Menurut Marcos Loina da Costa, seorang mantan TBO dari Cairui (Laleia, Manatuto), seorang TBO lain dalam kesatuannya hampir dibunuh oleh seorang tentara karena tidak sanggup membawa beban berat yang berisi beras, peluru, dan peluru mortir, namun akhirnya ia diselamatkan oleh prajurit lain. Ia mengingat bahwa sesudah kejadian tersebut "semua barang yang saya bawa semuanya terasa ringan karena ketakutan saya."

80. Seperti telah disebutkan di atas, Komisi telah menerima informasi bahwa seorang TBO berusia 17 tahun, Domingos Mário, disiksa dan dihilangkan sesudah menulis

.....
* Wawancara CAVR dengan Marcos Loina da Costa, Laleia, Manatuto, 24 Juni 2003. Marcos Loina da Costa menambahkan bahwa komandan batalion memerintahkan pemulangan semua TBO akibat tindakan semena-mena dari anak buahnya.

surat kepada Falintil.⁶⁷ Pernyataan lain menyampaikan kasus seorang anak berusia 14 tahun, Teodoro de Oliveira, yang ditembak dan dibunuh pada Hari Natal 1984 oleh Yonif 131 di Serelau (Lospalos, Lautém) untuk alasan yang tidak diketahui.⁶⁸

Pembayaran

81. Pada umumnya, TBO mendapatkan makanan untuk diri mereka sendiri atau dibawa pulang ke keluarganya sebagai upah atas pelayanan mereka. Tidak ada satu pun mantan TBO yang dilaporkan menerima pembayaran secara teratur dan dokumen-dokumen militer tidak menyebutkan adanya pembayaran. Ini berbeda dengan anggota Wanra atau Ratih, yang mendapatkan gaji bulanan atau untuk suatu periode operasi (lihat bagian mengenai militerisasi masyarakat Timor-Leste pada Bagian 4: Rezim Pendudukan).

82. Banyak mantan TBO melaporkan telah menerima sedikit uang pada akhir tugasnya. Domingos Maria Bada, seorang mantan TBO yang tugasnya sebagian besar mencari penduduk sipil di hutan, melaporkan bahwa setelah bertugas selama enam bulan bersama Yonif 410 pada 1978 ia diberi Rp6.000,00.⁶⁹ Seorang mantan TBO lainnya melaporkan telah menerima Rp20.000,00 setelah sembilan bulan masa tugasnya bersama Yonif 133 berakhir pada 1981, dan menerima Rp25.000,00 pada Februari 1985 setelah setahun bertugas bersama Yonif 507. Setiap selesai satu masa tugas, TBO ini menerima sertifikat resmi yang berjudul “Surat Tanda Penghargaan” (1981) dan “Ucapan Terima Kasih” (1985) yang ditandatangani oleh komandan batalion.⁷⁰ Gil Parada Belo Martins menerima Rp25.000,00 dan selebar sertifikat dari Linud 401/Banteng Raiders, yang mengatakan padanya bahwa sertifikat itu kelak akan membantunya memperoleh pekerjaan.⁷⁰

Setelah masa tugas

83. Dalam banyak kasus seorang TBO dikembalikan ke desanya setelah tugas mereka berakhir. Buku pedoman Babinsa secara khusus mengharuskan TBO dikembalikan ke rumah masing-masing dan didorong untuk kembali ke sekolah. Seorang TBO mengingat ada ratusan TBO yang pulang menggunakan kapal laut ke distrik-distrik bagian timur sesudah batalion mereka meninggalkan Timor-Leste. Ia mengungkap:

Sebagian tinggal di Dili, karena sulitnya ekonomi di desa. Saya diberi uang Rp9.000,00 dan sertifikat. Kami tinggal di Kodim Dili dan kemudian dipindahkan ke Koramil Becora. Kami baru saja ditinggalkan tentara. Anak-anak kecil diancam oleh anak-anak yang lebih besar dan selalu ada risiko dirampok. Keadaan sangat kacau dan kadang-kadang saya dianiaya. Tapi kami merasa bebas: tidak ada lagi memasak, mengumpulkan kayu bakar, atau mencuci. Saya dikasih seragam militer, yang terlalu besar sehingga sampai lutut seperti gaun.⁷¹

* Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2004. João Rui mengatakan kepada Komisi bahwa ia juga bisa mendapatkan Rp 25.000,00 lagi dengan berbelanja atau melakukan tugas lain dari tentara.

84. Dalam beberapa kasus, para TBO dibawa ke Indonesia bersama para prajurit yang telah berakhir masa tugasnya. Kasus Alfredo Alves, yang diperdaya untuk naik ke atas kapal dengan dimasukkan ke sebuah peti, menggambarkan bahwa ikutnya para TBO tidak selalu bersifat sukarela (lihat 7.8.3: Pengiriman anak-anak ke Indonesia, paragraf 343 - 419).

85. Seperti dicatat di atas, bagi sebagian TBO pengalaman tersebut menghasilkan hubungan jangka panjang dengan militer Indonesia dengan bergabung dalam tentara atau menjadi seorang anggota Wanra atau kelompok paramiliter lain. Namun, dalam banyak hal, tugas sebagai TBO tidak memiliki stigma yang sama dengan menjadi anggota milisi. Sudah dipahami bahwa banyak yang terpaksa menjadi TBO, bahwa mereka sering hanya melakukan pekerjaan kasar dan bahwa dalam banyak hal mereka menjadi korban.

86. Dokumen-dokumen militer tahun 1982 yang dirampas oleh Falintil secara khusus memerintahkan tentara mengembalikan anak-anak ke sekolah setelah tugas mereka selesai dan setidaknya sejumlah TBO dapat kembali ke sekolah dengan umur yang sedikit lebih tua daripada teman sekelasnya karena kelancaran mereka berbahasa Indonesia.⁷² Namun demikian, kesempatan pendidikan ini hanyalah terbatas dan ada selama tahun-tahun awal konflik ketika penggunaan TBO anak sedang pada puncaknya. Dengan bertugas selama setahun atau lebih di kamp-kamp militer atau di hutan-hutan berarti bahwa TBO anak kehilangan kesempatan apapun yang ada.

Anak-anak dalam operasi: Operasi Keamanan

87. Pada pertengahan 1981, militer Indonesia melancarkan operasi yang melibatkan puluhan ribu orang Timor-Leste di seluruh wilayah untuk dijadikan pagar manusia dalam upaya menangkap Fretilin dan anggotanya. Taktik ini digunakan pada berbagai kesempatan dalam operasi-operasi yang secara umum disebut Operasi Kikis. Operasi yang dilancarkan pada pertengahan 1981 disebut Operasi Keamanan dan ini adalah yang terbesar yang dilancarkan oleh Operasi Kikis di Timor-Leste (lihat bagian mengenai Operasi Keamanan dalam Bagian 4: Rezim Pendudukan dan Bab 7.5: Pelanggaran Hukum Perang untuk pembahasan yang terperinci mengenai operasi ini).

88. Meskipun TBO ditugaskan dalam Operasi Keamanan, beberapa ribu penduduk sipil, baik dewasa maupun anak-anak, direkrut secara khusus untuk operasi tersebut. Terdapat keragaman di masing-masing wilayah, tapi di sebagian besar tempat, semua lelaki di atas 12 tahun dikumpulkan pemerintah setempat atau personel militer dan ditugaskan pada kesatuan militer yang terlibat dalam operasi tersebut. Helio Freitas mengungkapkan bahwa di desanya perintah bagi semua lelaki untuk bergabung, tanpa menyebutkan umur, datang dari militer melalui kepala desa. Kepala rukun

* Pada saat Osório Florindo kembali ke sekolah, setelah tidak masuk selama tiga bulan karena Operasi Kikis, ia melihat bahwa sekolahnya memberikan penghargaan kepada murid yang berpartisipasi dalam operasi tersebut berupa kenaikan kelas. Wawancara CAVR dengan Osório Florindo, Dili, 31 Mei 2003.

tetangga dan rukun warga memastikan bahwa semua laki-laki di desanya direkrut. Tidak ada pendaftaran resmi atau pemeriksaan usia:

Liurai [kepala desa], Koramil, dan Hansip mengumpulkan semua masyarakat, semua laki-laki dan memeriksa kondisi mereka. Anak kecil dipisah dan diperiksa kondisi mereka, bukan umur mereka.

89. Yang paling muda dan terpilih bergabung dalam operasi itu berumur 10 tahun.*

90. Eduardo Casimiro dari Atsabe (Ermera) mengatakan kepada Komisi bahwa tentara mendatangi sekolahnya untuk mengambil para murid ke Kodim sebelum berangkat ke Ainaro. Namun, karena berusia 12 tahun, ia dianggap masih terlalu muda untuk direkrut.⁷³ Osório Florindo juga mengatakan kepada Komisi bahwa 1.000 orang penduduk dari Subdistrik Luro (Lautém) bergabung ke dalam operasi, termasuk semua anak lelaki dari sekolah dasarnya, para guru mereka, dan anak-anak sebayanya yang tidak bersekolah.⁷⁴

91. Usia minimum untuk perekrutan sangat berbeda-beda. Profil Komunitas menunjukkan bahwa banyak anak-anak usia sekolah dipaksa ambil bagian dalam Operasi Keamanan. Di Pairara (Moro, Lautém) semua anak berusia 17 tahun ke atas direkrut dan di Vatuvou (Maubara, Liquiçá) sekitar 600 orang direkrut, termasuk anak-anak. Di Vemasse Tasi (Vemasse, Baucau) penduduk ingat bahwa selama operasi tersebut, hanya perempuan, bayi, dan orang lanjut usia yang tinggal di rumah. Di Aissirimou (Aileu, Aileu) dan di beberapa desa di Liquiçá, semua anak usia sekolah diharuskan bergabung. Di Lospalos dan Tutuala (Lautém), semua penduduk lelaki di atas usia 15 tahun direkrut paksa dan di Quelicai (Baucau) dan Viqueque (Viqueque) lelaki yang berusia 13 tahun juga ambil bagian.⁷⁵

92. Ada juga tempat yang hanya orang dewasa yang direkrut. Di Desa Parlamento (Moro, Lautém), hanya orang yang berusia di atas 17 tahun yang disertakan dalam operasi dan di Selo Malere (Aileu, Aileu) pada 1979, ibu dan anak-anak tinggal di rumah sementara semua lelaki dewasa bergabung dalam operasi.⁷⁶

93. Pejabat pemerintah sipil setempat, seperti camat dan kepala desa, mengarahkan proses perekrutan dengan berkoordinasi dengan komandan militer setempat. Dalam beberapa kasus mereka bisa memengaruhi usia minimum orang yang akan direkrut. Misalnya, seorang camat di Railaco (Ermera), Francisco da Conceição Guterres, diminta menyediakan 500-600 orang untuk bergabung dengan operasi tersebut. Ia ingat mengatakan kepada komandan Koramil bahwa orang dewasa di daerahnya cukup memenuhi jumlah tersebut dan menanyakan kepada komandan tersebut siapa yang akan bertanggung jawab mengenai anak-anak itu jika makanan habis. Pada akhirnya, hanya mereka orang yang berusia di atas 30 yang didaftarkan.⁷⁷

* Wawancara CAVR dengan Helio Freitas, Dili, 19 Mei 2003. Beberapa narasumber (termasuk seorang mantan camat) menyebutkan camat tersebut sebagai orang yang berperan memimpin pendaftaran, di bawah pengarahannya dari pihak berwenang militer. Wawancara CAVR dengan Francisco da Conceição Guterres, Tocoluli, Railaco, Ermera, 17 Juni 2003.

94. Sementara ada beberapa laporan mengenai orang yang direkrut yang terperangkap dalam tembak-menembak, umumnya mereka yang dipaksa bergabung menderita penyakit dan kelaparan, yang dalam sebagian kasus mengakibatkan kematian.* Sejumlah peserta melaporkan bahwa tentara memberi mereka sedikit jagung setiap minggu. Menurut Osório Florindo, yang ketika itu berusia 15 tahun, orang-orang dapat bertahan hidup dengan mencari makanan di hutan. Setiap pagi mereka menyiapkan bekal makanan untuk hari itu dan kemudian berjalan, tanpa berhenti untuk alasan apapun. Jika tidak ada jalan, mereka akan mengambil jalan pintas melalui hutan.⁷⁸

95. Perekrutan massal anak-anak dan lelaki dewasa untuk keperluan operasi ini merupakan gejala yang berbeda dengan perekrutan TBO pada umumnya. Akan tetapi, banyak TBO juga mengambil bagian dalam operasi tersebut. Sementara TBO tidak menerima pelatihan khusus, mereka juga dibedakan dengan orang lain yang direkrut untuk Operasi Kikis oleh kenyataan bahwa mereka melayani anggota tentara tertentu atau kadang-kadang melayani anggota Hansip tertentu. Pada 1982, satu dokumen militer menyebutkan bahwa sejak awal operasi setiap kesatuan menggunakan TBO, yang jumlah keseluruhannya diperkirakan 1.200, atau 10% dari seluruh kekuatan pasukan (melebihi persentase yang diizinkan yaitu 5-7%).[†] Tidak diketahui berapa orang dari 1.200 TBO tersebut yang berusia di bawah umur, meskipun dokumen itu menyebut usia antara 12 dan 35 tahun dan pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang ikut operasi ini mengatakan bahwa anak-anak berumur 11 tahun juga ikut serta.

96. Seorang anak berusia 11 tahun, Helio Freitas, pada awalnya tidak terpilih untuk ikut operasi tersebut, tetapi ia sukarela bergabung sebagai TBO untuk seorang Hansip yang mengenal keluarganya. Helio menjelaskan kepada Komisi bahwa ia meminta bergabung karena takut akan dihukum para prajurit jika tetap tinggal di desanya. Kelompoknya mendaki Gunung Matebian, dengan barisan tempur di baris depan, terdiri atas Hansip, tentara, dan TBO mereka masing-masing. Terdapat sekitar 15-20 orang Hansip dan satu peleton yang terdiri atas 30 tentara. Kebanyakan anggota Hansip masing-masing memiliki satu orang TBO, sementara para prajurit tentara berbagi beberapa TBO di antara mereka. Satu atau dua kilometer di belakang mereka ada lebih banyak militer, Hansip, TBO, dan penduduk sipil. Helio Freitas adalah satu-satunya TBO anak yang berada di garis depan, tetapi di belakang ada TBO lain seusianya dan banyak anak-anak di antara penduduk desa. Semua anak-anak berusia di atas 10 tahun. Tanggungjawabnya sama dengan para TBO

* Pernyataan HRVD 05785 mencatat bahwa lima orang teman deponen telah meninggal karena kekurangan makanan dan obat-obatan ketika terjadi operasi di Manatuto. Dalam basis data pelanggaran hak asasi manusia juga ada kesaksian tangan-kedua mengenai seorang laki-laki berumur 15 tahun bernama Januario Mendes yang ditembak mati di kamp pada waktu Operasi Kikis oleh seorang anggota Hansip di hadapan dua orang saksi. Pernyataan HRVD 03943.

† Instruksi Operasi No. INSOP 3/II/1982, halaman 7: "Sejak permulaan Operasi Pemulihan Keamanan, setiap satuan menggunakan TBO. Jumlah TBO yang diizinkan adalah antara 5%-7% dari jumlah pasukan. Tetapi kebanyakan satuan menambahkan jumlahnya dengan memberi dukungan bukan kepada satuannya, tapi kepada perorangan, sehingga menjadi 10% dari kekuatan. Pada Periode awal OPS KIKIS pertengahan 1981, ada 15 batalion yang beroperasi dengan jumlah 1.200 orang TBO."

yang digunakan dalam operasi biasa: memasak, mencuci, dan menyiapkan kamp. Kelompoknya tidak bertemu Falintil dan hanya menangkap dua penduduk sipil, salah satunya anak-anak.⁷⁹

Anak-anak yang direkrut milisi pro-otonomi

97. Walaupun paramiliter telah ada sejak hari-hari pertama pendudukan Indonesia, pada 1998-1999 muncul suatu jenis baru paramiliter. Ini merupakan tanggapan terhadap iklim politik di Timor-Leste yang tercipta oleh jatuhnya Soeharto dari kekuasaan dan indikasi-indikasi dari Presiden Habibie mengenai pergeseran politik terhadap wilayah ini, yang berpuncak pada pengumumannya mengenai Jajak Pendapat pada Januari 1999. Beberapa bulan sebelum pengumuman itu sudah ada tanda-tanda mengenai mobilisasi kelompok-kelompok milisi, namun sejak awal 1999 jumlah milisi meningkat dan mereka bergerak cepat merekrut ribuan anggota. Milisi yang telah lama ada, seperti Tim Saka, Tim Alfa, dan Halilintar, juga berusaha memperbesar keanggotaannya. Milisi tersebut merekrut anggota dari berbagai organisasi pertahanan sipil, seperti Ratih dan Hansip dan juga dari jaringan kelompok kriminal, pemuda, dan gerombolan lainnya, orang-orang Timor Barat dan anggota-anggota aktif tentara. Mereka juga merekrut banyak pemuda, termasuk anak-anak, dalam jumlah yang tidak diketahui. (Daftar keanggotaan dan catatan lain diperkirakan telah diambil atau dihancurkan pada 1999; lihat Bagian 4: Rezim Pendudukan untuk informasi lebih lengkap tentang milisi 1999.)

98. Dalam kasus-kasus perekrutan anak-anak yang didokumentasikan Komisi, 6,2 % (9/146) dilakukan oleh milisi prointegrasi. Semua kasus itu terjadi pada 1999. Enam dari sembilan kasus melibatkan anak-anak usia 15 tahun dan lebih. Tiga kasus lainnya melibatkan anak-anak yang tidak diketahui umurnya. Angka-angka ini tidak menunjukkan bahwa anak-anak dijadikan sasaran perekrutan milisi. Meskipun demikian, angka-angka tersebut juga tidak menunjukkan bahwa anak-anak diberi perlindungan yang memadai terhadap perekrutan.

99. Analisis ini didukung oleh sumber-sumber lain yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggota milisi adalah orang muda dan remaja. Seorang reporter Timor-Leste mengatakan kepada seorang peneliti UNICEF bahwa milisi Besi Merah Putih (BMP) memiliki 100 anggota yang berusia di bawah 18 tahun ketika reporter perempuan ini berkunjung ke Liquiçá pada April 1999:

Saya berbicara dengan beberapa anggota BMP. Mereka masih muda, sangat muda. Ada beberapa senjata yang besarnya hampir sama dengan mereka.⁸⁰

100. Pada September 1999, seorang wartawan lain melaporkan bahwa sebagian besar milisi adalah remaja dan dalam beberapa kasus, anak-anak yang kelihatannya baru berusia 12 tahun.⁸¹ Seorang anggota milisi anak dari Atabae (Bobonaro) memberitahukan bahwa sekitar 60 anak lainnya, termasuk 20 anak perempuan, telah direkrut ARMUI (Atabae Rela Mati untuk Integrasi), suatu kelompok bentukan dari kelompok paramiliter lama Halilintar di Atabae.⁸²

101. Kelompok-kelompok milisi dibagi ke dalam kelompok-kelompok lebih kecil menyerupai militer seperti peleton dan kompi. Misalnya, seorang anak anggota milisi ARMUI mengatakan kepada UNICEF bahwa milisi tersebut memiliki 20 peleton, yang masing-masing terdiri atas 40 orang.⁸³ Meskipun hanya sedikit anggota milisi anak yang sudah diwawancarai, mereka memberitahukan bahwa ada anak-anak lain di dalam kelompok mereka. Seorang anggota gerakan klandestin, yang dipaksa bergabung dengan Dadurus Merah Putih di Maliana (Bobonaro), menyampaikan kepada UNICEF bahwa ada lebih daripada 10 anak laki-laki di dalam kelompoknya yang ambil bagian dalam tugas penjagaan dan pembakaran rumah, di antara mereka ada yang baru berusia 10 tahun.⁸⁴

Metode perekrutan

102. Menurut satu laporan yang dikeluarkan Yayasan HAK beberapa bulan sebelum Jajak Pendapat, terjadi suatu “gelombang keanggotaan paksa” pada Desember 1998 dan Januari 1999 ketika milisi mulai merekrut penduduk sipil.⁸⁵ Perekrutan disebutkan dilakukan dengan target yang ditentukan pejabat pemerintah dan militer—biasanya 10 orang untuk setiap desa.⁸⁶ Milisi BMP, yang dibentuk pada 27 Desember 1998 di Maubara, Liquiçá:

Anggotanya direkrut dari kalangan petani biasa, orang tua, dan anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun. Menurut beberapa narasumber, proses perekrutan dilakukan dengan teror, intimidasi, ancaman kematian, dan stigmatisasi sebagai orang “prokemerdekaan.” Orang-orang yang akhirnya mau bergabung dengan kelompok tersebut dijanjikan upah sebesar Rp25.000,00 per hari. Kelompok ini adalah salah satu yang paling aktif melakukan teror, intimidasi, melukai dan membunuh penduduk sipil.⁸⁷

103. Kesaksian, keterangan baru, pernyataan yang disampaikan para pelaku dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK)* dan Profil Komunitas⁸⁸ mengindikasikan bahwa banyak anak-anak yang bergabung dengan milisi karena paksaan dan intimidasi, termasuk ancaman mati terhadap mereka atau keluarga mereka. Semua anak yang diwawancarai untuk penelitian UNICEF dan banyak dari mereka yang memberikan pernyataan kepada PRK mengaku telah direkrut secara paksa. Sementara pengakuan tersebut agaknya dapat dipercaya dan didukung oleh perekrutan anggota-anggota kelompok klandestin,⁸⁹ kenyataan bahwa sampel ini hanya mencakup mereka yang memilih kembali ke Timor-Leste harus dipertimbangkan ketika menilai pernyataan-pernyataan tersebut. Ini khususnya berlaku karena pengucilan yang dialami oleh mantan anggota milisi.

* Komisi telah membuat suatu basis data dari pernyataan yang diberikan oleh para pelaku yang berusaha kembali ke dalam kehidupan desanya, yang berjumlah 1.543 pernyataan, 47 pernyataan di antaranya berasal dari anak-anak. Lihat Bagian 9: Rekonsiliasi Komunitas.

104. Rofino Mesak mengikuti program rekonsiliasi komunitas Komisi di Desa Abani (Passabe, Oecussi) karena keterlibatannya dalam milisi Sakunar (Kalajengking) ketika berusia 17 tahun. Ia mengatakan bahwa dirinya dipaksa bergabung dalam milisi tersebut oleh C3, pemimpin milisi tersebut, dengan ancaman akan dibunuh.⁹⁰

105. Antero bergabung dengan milisi Sakunar hanya satu bulan sebelum Jajak Pendapat pada 1999 ketika berusia 17 tahun. Diwawancarai di Penjara Becora di Dili, ia mengatakan kepada seorang peneliti:

*Milisi mengancam akan membunuh saya kalau tidak bergabung dengan mereka – karena itulah saya ikut mereka...Pemimpin Sakunar mengatakan kepada kami kalau semua anak muda harus ikut milisi dan kalau menolak, mereka akan ditembak. Saya patuh pada perintah mereka karena saya takut mati. Perintah mereka adalah kami harus membakar rumah karena pemiliknya adalah dari kelompok prokemerdekaan...Di Kefa [Kefamenanu, Timor Barat] banyak sekali milisi Sakunar yang umurnya di bawah 18 tahun. Ada 50-60 pemuda, dari 14 tahun ke atas, yang sebagian besar asal dari Kefa. Hampir semua kelihatan takut. Komandan-komandan mereka bisa menyuruh mereka melakukan apa saja dan kalau mereka tidak mau, mereka dipukuli sampai luka parah...Sejak ikut milisi itu, saya tidak belajar hal-hal yang berguna. Saya hanya belajar mengenai kekejaman—cara membunuh, menghancurkan, dan membakar semuanya di Timor Timur.**

106. Venancio, berasal dari Desa Lauhata (Liquiçá, Liquiçá), bergabung dengan milisi BMP empat bulan sebelum Jajak Pendapat, ketika ia berusia 16 tahun. Keluarganya pro-otonomi, tetapi ia mengatakan kepada UNICEF bahwa ia bergabung dengan milisi karena ancaman dan intimidasi:

Milisi datang bulan April 1999 setelah mereka menyerang gereja. Saya kaget dan takut karena mereka datang ke sini membawa parang penuh darah. Mereka bilang, “Kalau kalian tidak ikut dengan kami, nanti kami bunuh kalian.” Ada yang tua dan ada yang muda. Mereka semua minum dan beberapa tutup mereka punya muka seperti ninja... Kadang-kadang waktu milisi datang mereka tawarkan uang dan kadang-kadang mereka ancam kami. Mereka bilang kami harus gabung dengan milisi dan Indonesia akan kasih kami uang, tapi setelahnya kami tidak terima apa-apa...Banyak anak-anak lain yang menjadi milisi tidak punya orangtua, berasal dari keluarga berantakan, putus sekolah, dan anak-anak yang terlibat dalam lingkaran perjudian.⁹¹

107. Ia mengatakan bahwa setiap malam ia harus bertugas jaga dan ada tujuh anak lain yang bertugas di pos pemeriksaan tempatnya bertugas.

* Kemudian keluar keputusan bahwa tidak ada bukti yang memberatkannya, UNICEF, halaman 66.

108. Dalam beberapa kasus, pemuda ditangkap dan dipukuli sebelum dipaksa ambil bagian dalam kegiatan milisi. Mundus de Jesus memberikan kesaksian pada sidang rekonsiliasi komunitas di *aldeia* Caicassa (Maubara, Liquiçá) bahwa, meskipun ia melarikan diri dari milisi, BMP menangkapnya pada 23 April 1999. Ia kemudian bergabung karena takut dibunuh. Waktu itu ia berumur 15 tahun dan diberi sepucuk senjata.⁹² Komisi juga mendengarkan kasus-kasus lain tentang perekrutan paksa orang muda, misalnya di Covalima untuk masuk kelompok milisi Laksaur.

109. Satu kasus lain, yang juga menunjukkan kerjasama erat antara TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan milisi, dilaporkan kepada Komisi oleh Santiago dos Santos Mendes. Santiago adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun di Vaviquina (Maubara, Liquiçá) ketika dipukuli dan dipaksa menjaga pos milisi sebelum dipulangkan karena luka-lukanya yang parah. Kepada Komisi ia mengatakan:

Waktu kejadian saya berumur 17 tahun. Pada 8 April 1999, milisi BMP [Besi Merah Putih] C7 memukul, meninju, menampar, menendang saya di Lisalau, Maubara. Setelah saya disiksa saya dibawa ke Maubara kota tetapi berjalan kaki. Saya berjalan kaki, C7 [dari] BMP mengikuti dengan motor.

Ketika kami sampai di Maubara kota, saya disuruh oleh C7 untuk melaporkan diri di Koramil Maubara, pada saat itu saya turuti saja karena saya diancam akan dibunuh jika tidak lapor diri. Di Koramil Maubara saya diinterogasi oleh TNI bernama C8 [orang Indonesia]. Setelah saya diinterogasi, C8 menyuruh saya untuk jaga di pos BMP.

Namun tidak jadi karena ada BMP bernama Jorge yang menolak dan melarang saya tidak boleh jaga karena kondisi saya saat itu sudah babak belur. Akhirnya saya diantar oleh BMP Jorge ke kampung saya di Pukelete [Maubara, Liquiçá]. Saya tinggal di kampung hanya dua minggu, karena C7 memaksa saya agar ke Atambua [Belu, Timor Barat]. Saat itu saya menolak tetapi C7 mau membunuh saya dan ancam pakai senjata rakitan. Akhirnya sayapun turuti saja. Kejadian ini terjadi karena saya anggota klandestin.'

110. Vasco mengatakan kepada UNICEF bahwa usianya 14 tahun ketika direkrut oleh BMP di Maubara (Liquiçá) pada 1999 dan menjadi anggota milisi ini selama delapan bulan. Ia adalah salah satu dari 15 anak dalam kelompoknya:

Milisi pertama datang ke desa saya awal Januari. Ketika datang banyak orang yang mereka pukul dan mereka bunuh beberapa orang di desa saya. Mereka katakan kepada kami kalau tidak mau gabung dengan mereka kami akan mati. Mereka bilang, "otonomi paling baik",

.....
* Pernyataan HRVD 05859. Lihat juga pernyataan 07239, di mana seorang anak laki-laki 15 tahun dianiaya dan dibenamkan ke air berulang-ulang oleh para anggota milisi Mahidi di Nunumogue (Hato Bullico, Ainaro) dan kemudian dipaksa ikut tugas jaga malam di *aldeia* Lelo-moo selama semalam sebelum ia berhasil melarikan diri.

dan tetap dengan Indonesia adalah jalan yang benar dan kalau kami ikut CNRT [Conselho Nacional de Resistência Timorese, Dewan Nasional Resistansi Timor] atau Falintil, mereka akan bunuh kami. Kami ketakutan dan harus bergabung dengan mereka kalau tidak mereka bilang akan bunuh kami. Mereka bilang kalau kami tidak lakukan apa kata mereka, mereka akan bunuh kami. Komandannya datang bersama satu kelompok milisi BMP. Waktu milisi datang orangtua saya sangat takut dan mereka bilang sama saya: "Kalau milisi minta kau lakukan apa saja, kerjakan saja, kalau tidak mereka akan bunuh kita." Mereka takut. Tadinya orangtua saya suruh saya sembunyi, tapi kemudian milisi temukan saya. Pertama kali milisi tangkap saya bulan Januari, mereka bilang sama saya: "Sekarang kamu milisi!" Mereka janji akan kasih saya uang dan beras dan mereka berikan saya itu semua. Kadang mereka kasih Rp 250 dan 10 kg beras.⁹³

111. Anak-anak perempuan juga direkrut paksa, kadang-kadang dipaksa memasak untuk para anggota milisi. Verónica do Rosário, mengungkapkan kepada Komisi bahwa ketika berusia 17 tahun ia ditahan bersama enam temannya di Umenoah (Cunha, Oecussi) pada April 1999 oleh milisi Sakunar. Milisi tersebut menyiksanya dan memaksanya memasak untuk mereka selama beberapa hari.⁹⁴ Seorang anak-anak anggota milisi ARMUI di Atabae (Bobonaro) mengatakan kepada seorang peneliti bahwa sekitar 20 anak perempuan dipaksa memasak untuk para komandan milisi.⁹⁵

112. Sudah 4 September 1999, hari diumumkannya hasil Jajak Pendapat, seorang anak berusia 16 tahun, Feliciano Machado, mengatakan bahwa dirinya direkrut secara paksa oleh Mahidi setelah diancam bahwa siapapun orang muda yang tidak bergabung akan dibunuh. Ia dipaksa menjaga sebuah pos milisi dan membakar rumah-rumah di Beicala (Hatu Udo, Ainaro).⁹⁶

113. Paksaan juga dilakukan melalui keluarga. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB menemukan bahwa:

Para orangtua diancam dan disuap untuk memaksa orang-orang muda, sedangkan para pemuda dianiaya dan diintimidasi untuk menjadi anggota milisi.⁹⁷

114. Akan tetapi, tidak semua yang direkrut dipaksa bergabung. Berbagai motif lain mencakup janji imbalan material (walaupun janji tersebut jarang dipenuhi) dan dalam beberapa kasus keinginan untuk lepas dari kemiskinan atau penganiayaan di rumah. Beberapa orang yang direkrut juga berasal dari keluarga yang mendukung atau memperoleh keuntungan dari pendudukan Indonesia, termasuk sebagian yang anggota keluarganya dibunuh oleh kelompok-kelompok prokemerdekaan.⁹⁸

Kegiatan

115. Begitu bergabung dengan milisi, anak-anak dikatakan terlibat dalam tugas penjagaan di desa-desa dan pos pemeriksaan di jalan-jalan utama, serta pembakaran dan pembunuhan ternak yang luas. Vasco menguraikan tugas-tugasnya, seperti membawa pesan, memasak, mengumpulkan informasi mengenai CNRT setempat, mendirikan pos pemeriksaan, dan membawa kayu bakar. Tetapi ia juga diperintahkan untuk ikut serta dalam berbagai kejahatan yang lebih berat:

*Pertama kali mereka ambil saya dari rumah, kami harus perkosa seorang perempuan dan kemudian bunuh apa saja yang bisa kami temui seperti binatang dan orang. Mereka perintahkan kami untuk perkosa. Kami melakukannya bersama-sama. Setiap hari kami dibawa mereka pakai mobil untuk bakar rumah, bunuh binatang, dan aniaya orang...Mereka ancam saya dan bilang bahwa saya harus bunuh orang dan perkosa perempuan. Mereka latih kami cara pakai senjata dan pisau, juga cara serang dan bunuh. Kami dikasih latihan di sebuah rumah di Kaekasain [Maubara, Liquiçá], markas besar milisi BMP. Seorang milisi Timor Timur guru kami. Kami juga dilatih dua kali seminggu selama dua jam...Kalau saya menangis di depan mereka, saya bisa mati. Saya cuma menangis kalau di rumah.**

116. Sembilan bulan sebelum Jajak Pendapat, Francis [nama samaran], berusia 17 tahun, direkrut oleh ARMUI. UNICEF melaporkan bahwa ayahnya telah memintanya bergabung dengan ARMUI pada Desember 1998, setelah milisi mulai secara sistematis memukuli orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan di desanya. Ia dipaksa ikut serta dalam penyerangan-penyerangan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai anggota klandestin:

Saya dipaksa melakukan operasi dari rumah ke rumah untuk menemukan anggota kelompok klandestin. Kami menemukan anggota-anggota kelompok klandestin Jesus Homen Salvador (JHS). Kami tahu di mana mereka karena milisi telah bikin daftar semua anggota klandestin di desa kami... Waktu kami menemukan anggota klandestin JHS, mereka dipukuli dan dimintai lulik-nya (benda keramat, dalam kasus ini sebuah ikat pinggang kain berwarna merah). Mereka bawa ikat pinggang lulik itu ke pos dan tunggu para pemiliknya datang mengambil, kemudian hajar mereka lagi.⁹⁹

117. Ayah tiri Francis dipukuli dan seorang teman yang anggota kelompok JHS kemudian dibawa ke pantai dan dibunuh sesudah anak itu terlihat dengan selempang bendera Timor-Leste.

* Ia kemudian menyangkal terlibat langsung dalam perkosaan tersebut. UNICEF, halaman 65.

Milisi anak yang dibunuh atau dihilangkan

118. Komisi tidak mendapatkan laporan mengenai anggota milisi anak yang terbunuh di Timor-Leste. Meskipun demikian, sejumlah anak mungkin meninggal dalam kamp-kamp pengungsi di Timor Barat, Indonesia. Sangat biasa bagi anggota milisi anak-anak dipaksa melintasi perbatasan oleh para komandan milisi mereka.¹⁰⁰ Komisi mendapatkan sedikitnya satu kasus anak yang hilang. Alda Martins mengatakan bahwa anak laki-lakinya yang berusia 17 tahun, Agustinho Martins Trinitade, telah direkrut secara paksa dari Railaco (Ermera) oleh seorang komandan milisi Aitarak yang bernama C9 pada 1999. C9 memaksa Agustinho lari ke Atambua bersamanya, tetapi kemudian C9 pulang sendirian. Belakangan Alda mendengar dari orang lain bahwa anaknya telah meninggal di Atambua tetapi ia tidak diberi tahu penyebab kematiannya.¹⁰¹

Dampak

119. Dampak terbesar pada anggota milisi anak diduga berkaitan dengan kesehatan jiwa mereka. Mereka tidak hanya mengalami trauma yang biasanya terkait dengan menyaksikan dan berpartisipasi dalam tindak kekerasan, tetapi mereka sekarang juga menanggung stigma berkepanjangan yang dilekatkan sebagian anggota masyarakat kepada orang-orang yang pernah terlihat berada di "pihak yang salah." Banyak mantan anggota milisi yang belum kembali dari Timor Barat (Indonesia) karena takut akan pembalasan atau pengucilan. Ketakutan ini ditambah dengan propaganda milisi dan pemaksaan yang berlanjut dari para pemimpin milisi terhadap para pengungsi di Timor Barat.

120. Mereka yang telah kembali pun menghadapi tantangan yang berat. Sementara hanya ada sedikit kasus kekerasan terhadap mantan milisi, khususnya anggota tingkat rendah, kekhawatiran akan pengucilan sosial memang berdasar. Menurut penelitian UNICEF:

Radikalisasi pemuda pro-otonomi membawa sedikit dampak positif. Dalam beberapa kasus anak-anak mendapatkan rasa kebersamaan. Namun sebagian besar dampaknya negatif. Sebagian besar anak-anak yang bergabung dengan milisi mengatakan merasa bersalah dan malu dan tampak sangat trauma dengan berbagai pengalaman mereka. Banyak juga yang mati rasa dalam melakukan berbagai tindak kekerasan yang luarbiasa. Sebagian besar, seperti para tentara anak prokemerdekaan, mengekspresikan ketidakpercayaan pada pihak yang berwenang, khususnya lembaga-lembaga pemerintah.*

* UNICEF, halaman 19. Seorang pejabat UNICEF mengatakan kepada seorang reporter: "Di antara para pemuda mantan milisi, dari sedikit yang kembali ke desa dan kota asal mereka, sebagian besar mengalami pengucilan dan dicap oleh komunitasnya." Christine T. Tjandraningsih, "Child soldiers, the story behind East Timor's freedom," *Kyodo* (kantor berita), 13 September 2001, halaman 3.

121. Venâncio, seorang mantan milisi yang direkrut ketika berusia 16 tahun dari Liquiçá, mengatakan kepada UNICEF:

Sering saya dapat mimpi buruk milisi mau bunuh saya. Waktu saya terbangun saya takut dan merasa tertekan. Anak-anak lain yang masih kecil juga terbangun setelah mimpi buruk di pos jaga. Saya sakit kepala setelah pulang ke Timor-Leste. Saya berusaha melupakan masa-masa itu tetapi kadang cerita buruk datang kembali, jadi saya lakukan apa saja supaya lupa. Kadang saya merasa sedih. Kadang anak-anak lain di sekolah mengata-ngatai saya milisi dan itu bikin saya sangat sedih—saya terpaksa bergabung dengan milisi. Kadang-kadang saya pikir orang-orang bicarakan saya dan saya merasa sangat sedih. Saya takut milisi akan kembali ke sini.¹⁰²

122. Demikian pula yang dikatakan Vasco kepada peneliti UNICEF:

Saya dapat mimpi buruk dan saya terbangun karena bayangan ada orang mau bunuh saya. Sekarang saya masih suka terbangun karena mimpi buruk. Saya tidak ingat mimpi saya tapi saya merasa takut ketika bangun. Kadang-kadang rasa senang dan sedih berubah cepat sekali.¹⁰³

Anak-anak dalam jaringan klandestin

“Anak-anak sekolah berumur lima sampai 10 tahun di Tanah Air kita tahu sebanyak yang diketahui orang dewasa tentang taktik penundukan oleh musuh, kontra-informasi, penyuaipan, dan tentang pembunuhan terhadap organisasi klandestin. Anak-anak ini lahir di masa perang, berperang; perang yang bukan hanya perang orangtua mereka, perang yang bukan hanya perang mereka—suatu perang, perlawanan seluruh rakyat menentang pendudukan asing.”

Xanana Gusmão, “A History that Beats in the Maubere Soul: Message to Catholic Youth in East Timor and Students in Indonesia,” Mei 1986.¹⁰⁴

123. Salah satu tonggak Resistansi menentang pendudukan Indonesia adalah Front Klandestin (*Frente Clandestina*). Jaringan bawahan ini menjalin hubungan dengan Falintil, Front Bersenjata (*Frente Armada*), menyediakan dukungan dan bertindak mengikuti instruksi mereka. Jaringan ini juga bertindak sebagai saluran antara *Frente Armada* dan Front Diplomatik (*Frente Diplomática*) yang terdiri atas para aktivis yang bekerja di luar negeri untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pada awalnya, jaringan bawahan hanya bekerja melalui hubungan-hubungan langsung antara komandan-komandan Falintil dengan kelompok-kelompok kecil. Akan

tetapi, pada awal dasawarsa 1990-an, gerakan klandestin berkembang menjadi suatu jaringan yang melingkupi seluruh wilayah negeri dan kegiatan-kegiatannya menjadi semakin terorganisasi secara terpusat.*

124. Anak-anak sudah terlibat dalam kegiatan sosial dan politik pada tahun-tahun ketika Fretilin masih menguasai wilayah dan sebagian besar penduduk, walaupun awalnya kegiatan ini tidak selalu bersifat klandestin.† Setelah “Wilayah Bebas” (*Zonas Libertadas*) yang terakhir hancur pada 1979, jaringan klandestin mulai beroperasi dan melibatkan anak-anak dalam kegiatannya sejak awal. Peran utama anak-anak adalah sebagai penghubung (*estafeta*), mata-mata, dan penyebaran informasi. Tidak ada perbedaan jelas di antara kegiatan-kegiatan ini, dan sering seorang anak mulai terlibat sebagai *estafeta* dan kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan klandestin lainnya.

Bagaimana anak-anak terlibat

125. Komisi tidak mendapatkan bukti bahwa Resistansi mempunyai kebijakan eksplisit mengenai pelibatan anak-anak dalam jaringan. Namun dalam praktik anak-anak dilibatkan karena mereka bisa berguna. Ada satu anggapan bahwa anak-anak kemungkinannya lebih rendah untuk dicurigai oleh militer Indonesia dibandingkan dengan orang dewasa. Keterlibatan anak-anak juga dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk menjamin kelanjutan Resistansi melalui apa yang diperkirakan sebagai suatu perjuangan yang panjang dan berat (*luta dura e prolongada*).¹⁰⁵ Menurut mantan kepala staf Falintil, Taur Matan Ruak (José Maria de Vasconcelos):

Kalau kita tidak menyiapkan orang-orang lain dan kita mati di tengah perjalanan kita, maka perjuangan kita akan berakhir. Jika ini yang akan terjadi, untuk apa kita menderita?...Bisa dikatakan, strategi ini membuat banyak pemimpin menyadari kenyataan bahwa generasi mendatang adalah faktor penentu dalam proses perjuangan. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada mereka. Jika kita berhasil melibatkan anak muda, bisa kita katakan bahwa kemenangan

.....
* Wawancara CAVR dengan António Tomás Amaral da Costa, Dili, 8 Desember 2003; wawancara CAVR dengan Francisco Guterres “Lú-Olo,” Dili, 28 Maret 2003. Mantan komandan Falintil Eli Foho Rai Boot (Cornelio Gama, L-7) menjelaskan perkembangan gerakan klandestin sebagai berikut: “...demikianlah dari tahun ke tahun, sedikit demi sedikit, perubahan terus berjalan. Kelompok ini semakin dikenal di setiap distrik. Dikenalnya kelompok di setiap distrik ini menunjukkan kelompok-kelompok yang bekerja bagi kemerdekaan terus bertambah, sekalipun di setiap kelompok di setiap distrik tidak saling mengenal. Tetapi mereka punya visi dan misi yang sama, yaitu bagaimana antarfront (front klandestin, diplomatik, dan front gerilya) bisa saling mendukung demi terjalannya hubungan erat demi satu tujuan yaitu kemerdekaan Timor-Leste.” Wawancara CAVR dengan Eli Foho Rai Boot (Cornelio Gama, L-7), mantan Komandan Kedua Region III, Laga, Baucau, 9 April 2003.

† Wawancara CAVR dengan Virgílio da Silva Guterres, Dili, 25 Mei 2004: “Yang usianya di bawah 17 tahun lebih banyak mengikuti kegiatan di *aldeia* seperti kebudayaan. Yang sudah kelas 3 sekolah dasar direkrut untuk diberi pelatihan tentang program alfabetisasi, kesehatan, dan pendidikan politik. Pegangannya adalah *Manual e Programa Político Fretilin* dan *Cartilha Política*.” Wawancara CAVR dengan Virgílio da Silva Guterres, Dili, 25 Mei 2004.

*sudah pasti. Kalau tidak, perjuangan akan melemah dan kita tidak bisa menjamin bahwa perjuangan akan berlanjut. Karena itu, anak muda bisa didefinisikan sebagai suatu faktor yang fundamental. Untuk tujuan itu, setiap keluarga Timor punya peran yang sangat penting, dari ayah sampai ibu dan anak, untuk membuat keluarga menjadi inti dari perlawanan.*¹⁰⁶

126. Sejak awal, Resistansi menggunakan hubungan keluarga untuk mendekati anak-anak. Misalnya, paman dan kakak di hutan menghubungi sanak-saudara yang muda untuk diminta membawa pesan atau memberikan makanan. Tidak lama kemudian, pencarian ini diperluas melalui Pandu Katolik (*Escuteiros*), kelompok-kelompok remaja Katolik di paroki-paroki, dan kelompok-kelompok orang muda yang lain.* Dengan pembentukan Conselho Nacional da Resistência Maubere (CNRM) pada 1987, peran pemuda klandestin lebih diakui secara resmi dan Komite Eksekutif menunjuk satu orang khusus untuk menangani urusan pemuda, termasuk anak-anak.†

127. Sejak 1988 semakin banyak pelajar sekolah menengah yang terlibat dalam jaringan bawahan. Para pelajar di sekolah Katolik berbahasa Portugis, Externato de São José, di Balide, Dili, mulai mengorganisasikan diri dan gerakan mereka menyebar melalui kegiatan-kegiatan olahraga atau melalui para mantan siswa yang telah menjadi guru di sekolah-sekolah lain. Para pemimpin Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sering bertemu dengan organisasi-organisasi pemuda lain dan membicarakan masalah-masalah politik di saat penyelenggaraan kegiatan olahraga antarsekolah. Eurico Guterres pernah menjadi ketua OSIS dan adalah seorang anggota klandestin pada waktu ia ditangkap pada 1988; penggantinya sebagai ketua OSIS di sekolahnya, Ricardo da Costa Riberio, juga terlibat dalam kegiatan klandestin.¹⁰⁷

128. Tidak ada petunjuk bahwa ada upaya eksplisit dari Falintil untuk merekrut pelajar ke dalam jaringan klandestin. Seorang pelajar merasakan dampak dari pendudukan ketika paman-pamannya terbunuh saat ia duduk di sekolah dasar dan ingat perkelahian-perkelahian yang terjadi di sekolah menengah pertama antara pelajar Timor-Leste dengan pelajar Indonesia yang memicu perasaan nasionalis. Namun, baru di sekolah menengah atas ia menjadi resmi terlibat dalam gerakan klandestin setelah menerima satu pesan dari Falintil:

* Maria Teresa dos Santos adalah seorang mantan pemimpin pemuda di Baucau dan pemimpin Mudika (Muda-Mudi Katolik, suatu kelompok resmi pemuda Gereja yang didirikan pada akhir dasawarsa 1980-an). Ia mengatakan bahwa tugas-tugas kelompok tersebut termasuk mengantarkan surat dan mengumpulkan dana untuk Falintil dengan meminta sumbangan untuk gereja. Lebih banyak perempuan yang dipilih untuk tugas ini karena prajurit tentara lebih sulit menggeledah mereka. Wawancara CAVR dengan Maria Teresa dos Anjos, Baucau, tidak bertanggal. Resistansi juga bekerja melalui kelompok pemuda lainnya, Sagrada Família. Kelompok ini adalah bagian dari jaringan klandestin dan tidak mempunyai status legal seperti yang dimiliki Mudika.

† Di setiap sekolah menengah ada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan kelompok-kelompok klandestin berusaha menyusup ke setiap OSIS. Sedini 1979 di Baucau, para pemimpin klandestin yang membangun jaringan melihat adanya potensi dalam kelompok-kelompok pemuda gereja. Menurut Marito Reis, "Saat itu kami berencana membangun jaringan dengan gereja karena kami tahu bahwa gereja punya organisasi pemuda." Wawancara CAVR dengan Marito Reis, Baucau, 17 November 2002.

Saya masuk ke sekolah menengah dan di sana saya bertemu dengan banyak teman saya yang terlibat dalam semacam gerakan klandestin, gerakan bawahan. Saya mulai merasa bahwa saya punya kewajiban untuk turut menyumbang, seperti menyumbang uang ke hutan. Salah seorang kerabat saya adalah anggota militer Indonesia, dan kami mencuri pakaian-pakaian seragamnya, lalu mengirimkan pakaian itu ke hutan untuk diberikan kepada Falintil. Waktu itu saya berumur sekitar 14 atau 15 tahun...Sebetulnya pada waktu itu saya tidak tahu banyak tentang gerakan klandestin, tapi teman saya mendapat surat dari Falintil dan dia tunjukkan kepada saya...Ada pesan dari Falintil yang mengatakan: "Kalian adalah masa depan negeri ini. Kalian harus giat belajar, tapi kalian juga harus cari cara untuk membantu kami di hutan." Jadi, itu mengilhami saya untuk melakukan sesuatu.¹⁰⁸

Alasan bergabung dengan Resistansi

129. Sebagaimana disebutkan di atas, anak-anak banyak yang mulai terlibat dalam kegiatan klandestin melalui kontak dengan anggota keluarga yang ada di hutan atau anggota Falintil. Ricardo da Costa Ribeiro mengatakan kepada Komisi bahwa ia mulai menghubungi pamannya di Falintil pada 1984 saat berusia 13 tahun setelah mendengar tentang tokoh-tokoh Resistansi dari teman-teman sekelasnya dan dari pastornya, Pastor Locatelli. Ia mengisahkan komunikasinya dengan pamannya:

Saya sering berhubungan dengan paman saya, Rodak, yang berada di hutan, bukan lewat surat, tapi lewat rekaman-rekaman kaset yang dia kirim kepada saya untuk saya dengarkan. Pada waktu itu saya berumur 15 tahun, kelas satu SMP, dan dia selalu memberi saya bimbingan tentang politik dan tujuan gerakan perlawanan. Saya sudah paham dan tahu pasti tentang hal ini, karena di Sekolah Menengah Pertama Fatumaca [Baucau] hampir setiap orang adalah anak dari seorang "GPK" [Gerakan Pengacau Keamanan]. Setiap hari kami biasanya bertanya satu sama lain: "Di mana ayahmu?" Dan setiap orang akan menjawab, "Ayah saya ada di hutan", "Ayah saya dibunuh oleh militer Indonesia."¹⁰⁹

130. Mengalami atau menyaksikan berbagai pelanggaran yang dilakukan militer Indonesia juga mendorong anak-anak untuk bergabung dengan jaringan klandestin. Sebagai contoh, Naldo Gil da Costa mengatakan kepada Komisi bahwa ia menjadi aktif sebagai seorang *estafeta* pada usia 11 tahun ketika ayahnya dieksekusi oleh tentara Indonesia setelah peristiwa serangan Falintil terhadap pos ABRI di Lospalos (Lautém) pada 11 Maret 1985.¹¹⁰

131. Aquilina Imaculada menjelaskan bahwa ia menjadi *estafeta* melalui hubungan keluarganya dan setelah mengalami pengalaman-pengalaman buruk di tangan militer Indonesia. Ia dan keluarganya dipaksa oleh ABRI untuk membujuk anggota-

anggota keluarga lainnya yang sedang berjuang bersama Falintil agar menyerahkan diri. Setelah hal ini mengakibatkan kematian beberapa anggota keluarganya, ia mengatakan bahwa ia disuruh menjadi *estafeta* oleh pamannya, Komandan Falintil Region I, Paulino Gama (Mauk Moruk) guna membantu keluarganya.¹¹¹

132. Dalam kasus-kasus yang dikaji oleh Komisi, anak-anak bergabung dengan jaringan klandestin secara sukarela. Tidak ada kasus mereka mengaku dipaksa bergabung, tetapi bagaimanapun juga, karena sering anak-anak bergabung untuk membantu anggota keluarga, mereka mungkin saja melakukannya karena merasa berkewajiban atau mereka merasa tidak dapat menolak. Juga ada sebagian anak yang direkrut secara kebetulan dan kesadaran politik mereka berkembang kemudian. Misalnya, Mateus da Costa disebutkan berusia 17 tahun ketika mendapat kesempatan bertemu dengan anggota Falintil pada 1983, ketika ia sedang berburu di hutan dekat Ainaro. Mereka membujuknya untuk bekerja sebagai seorang *estafeta*, yang kemudian membawanya pada pengorganisasian kelompok-kelompok klandestin.¹¹² Kasus-kasus lain mengindikasikan bahwa anak-anak digunakan tanpa ada persetujuan yang jelas dari mereka ataupun pengetahuan mengenai risiko yang terkandung di dalamnya. Francisco Silva Guterres dari Becusi (Dili) mengungkapkan bagaimana suatu hari ia diberi sepucuk surat oleh seseorang yang tidak dikenal untuk disampaikan:

Dia mengatakan kepada saya bahwa saya harus pergi ke Koramil dan menonton TV di sana, dan akan ada seseorang yang menemui saya untuk mengambil surat itu. Sebelum saya pergi, dia berkata, "Kamu harus berpakaian seperti yang telah mereka rencanakan" yang berarti bahwa saya harus memakai seragam putih. Orang itu memasukkan satu amplop ke saku belakang saya untuk disampaikan kepada seseorang yang juga saya tidak tahu, yang akan datang ke Koramil pada malam itu saat saya dan orang-orang lain sedang menonton televisi. Orang yang menyuruh saya melakukan ini memberi instruksi bahwa ketika orang itu datang: "Kamu jangan berbalik untuk melihat. Jangan lakukan itu." Maka saya pun mengikuti instruksi-instruksi ini. Dan orang itu pun datang dan mengambil surat tersebut dari saku belakang saya, lalu membawanya pergi, dan saya tidak pernah tahu siapa yang mengambil amplop itu."¹¹³

Dampak

133. Sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya mengenai pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan kekerasan seksual, ada banyak risiko pribadi ketika terlibat dalam gerakan Klandestin. Militer, polisi, dan badan-badan lain mengarahkan sasaran pada anggota-anggota gerakan bawahan untuk memutuskan jalur dukungan pada gerakan perlawanan bersenjata. Mereka juga ingin memperoleh informasi mengenai jaringan, mengenai pejuang bersenjata, dan mengenai tempat keberadaan pemimpin-pemimpin Falintil. Anak-anak tidak diperlakukan dengan perkecualian oleh pihak berwenang Indonesia. Banyak kasus penganiayaan terhadap anak-anak yang menjadi anggota Klandestin diuraikan di bawah ini.

134. Seperti anak-anak yang terlibat sejak usia dini dalam militer Indonesia, mereka yang terlibat aktif dalam jaringan Klandestin juga mengalami masalah dalam pendidikan mereka. Alexio Cobra menyatakan bahwa sesudah penutupan Sekolah Externato di Dili, yang merupakan satu pusat gerakan Klandestin, beberapa pelajar yang sudah sering ditahan memutuskan menghentikan sekolahnya dan berkonsentrasi pada gerakan.¹¹⁴ João Sarmento, yang bersekolah di Seminari Nossa Senhora de Fátima, yang letaknya bersebelahan dengan sekolah tersebut, mengatakan bahwa ia meninggalkan sekolah selama enam bulan karena ada desas-desus bahwa Externato dan sekolah-sekolah di sekitarnya akan diserang dan ditutup.¹¹⁵

Estafeta

135. Istilah *estafeta* diberikan kepada para kurir yang membawa informasi dan surat-menyurat untuk Resistansi. Mereka juga memasok makanan, obat-obatan, dan barang-barang lain untuk orang-orang yang tinggal di dalam hutan. Sebagaimana ditunjukkan oleh contoh-contoh di atas, banyak anak masuk ke dalam gerakan klandestin dengan bekerja sebagai *estafeta*. Kegiatan *estafeta* banyak bergantung pada hubungan keluarga dan dimulai segera setelah invasi ketika para gerilyawan berusaha berkomunikasi dengan anggota-anggota keluarga mereka di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Indonesia. Untuk informasi lebih jauh tentang kemunculan front klandestin, lihat Bagian 5: Resistansi: Struktur dan Strategi.

136. Gregório Saldanha mengatakan bahwa dirinya baru berumur 13 tahun ketika konflik pecah dan ia bersama keluarganya melarikan diri ke Karau Maten, suatu wilayah pergunungan di dekat Dili. Mereka kembali ke Dili tiga bulan kemudian setelah tentara Indonesia menjatuhkan selebaran dari udara yang menyerukan kepada orang-orang untuk menyerah. Francisco Lobo, kakak laki-laki tertua Gregório, meneruskan menjadi gerilyawan di hutan:

Kami bersepakat bahwa saya akan kembali ke kota dan kakak saya, Francisco Lobo, akan terus tinggal sebagai gerilyawan. Paman saya, Mau Tera, yang tinggal di pinggiran kota, bekerja sebagai estafeta, menyampaikan surat-surat ke dalam dan ke luar...Saya sendiri selalu bertemu dengan kakak saya [Francisco Lobo] pada tahun-tahun 1977-1978...dan itu berlanjut...Keberadaan mereka di hutan adalah motivasi besar bagi kami, karena mengetahui bahwa gerakan perlawanan masih hidup, jadi sepanjang 1980-an saya memainkan bagian aktif dalam jaringan klandestin yang luas dan sistematis.¹¹⁶

137. Ketika gerakan klandestin menjadi semakin terorganisasi dan terstruktur, dibentuklah sistem-sistem penyampaian informasi resmi dan sangat rahasia yang dikelola oleh *estafeta*. Naldo Gil da Costa menggambarkan kerja seorang *estafeta* sebagai berikut:

Ketika menjadi seorang estafeta, di hari-hari pertama saya diberi arahan-arahan mengenai bagaimana membawa surat ke dalam dan ke luar kota dan hutan. Bila bertemu dengan musuh atau tentara di

tengah perjalanan, kami harus melenyapkan surat-surat yang kami bawa dengan cara melennanya. Kami dilatih oleh anggota-anggota Falintil yang diberi tugas ini oleh Komandan...Sebagai seorang estafeta saya ditugaskan untuk mengorganisasi caixa geral ["kotak umum," pusat jaringan klandestin di wilayah tertentu] untuk menyampaikan surat antara anggota Falintil dan mereka yang bekerja sebagai anggota klandestin di kota-kota. Saya tidak pernah memberikan informasi, baik lisan maupun tertulis, kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya.¹¹⁷

138. Tidak semua *estafeta* itu anak-anak. Namun demikian, ada keuntungan taktis dari menggunakan anak-anak untuk melakukan kerja ini. Analisis mengenai pernyataan-pernyataan yang diambil oleh Komisi menunjukkan bahwa mayoritas pelanggaran oleh aparat keamanan Indonesia dilakukan terhadap orang-orang yang berusia antara 18 dan 40 tahun, yang menunjukkan bahwa kelompok usia ini yang menjadi fokus perhatian mereka.

139. Anak-anak cenderung kurang dicurigai. Aquilina Imaculada menceritakan pengalamannya sebagai seorang *estafeta* antara 1990 dan 1993 ketika anak-anak digunakan untuk menghindari kecurigaan:

Pada waktu itu, kebebasan bergerak bagi orang-orang dewasa terbatas, maka kami, anak-anak, diajari untuk menjadi penghubung, walaupun ini sangat berisiko karena jika diketahui orang lain, ini bisa fatal bagi keamanan seluruh keluarga kami. Karena itu, kami harus berpikir kreatif, beroperasi seperti tikus di rumput. Kalau kami datang dari satu arah, kami harus kembali dari arah yang lain. Kami sering mencuri waktu di saat mengambil air...atau mengumpulkan kayu bakar, atau waktu kami memberi makan ternak. Kadang kami keluar di malam hari dan kadang saat fajar sebelum orang-orang bangun tidur.¹¹⁸

140. Seperti yang digambarkan kasus-kasus di atas, bekerja sebagai *estafeta* sering merupakan pintu masuk pertama ke dalam gerakan klandestin dan dalam banyak kasus ini membawa pada kegiatan-kegiatan klandestin yang lain. Ricardo Ribeiro, misalnya, berlanjut dengan mengorganisasikan orang muda, baik di Sagrada Familia maupun kelompok-kelompok pemuda. Karena dukungan yang diberikan orang-orang sipil kepada kerabat mereka yang anggota Falintil, militer Indonesia mulai memindahkan keluarga para anggota Falintil menjauh dari kampung halaman mereka dan akhirnya ke Pulau Ataúro (Dili) pada awal dasawarsa 1980-an.¹¹⁹

Anak-anak sebagai mata-mata dan pengintai

141. Dalam dasawarsa 1990-an, orang dewasa yang terlibat dalam front klandestin mulai melibatkan anak-anak sebagai pengintai dan sebagai penjaga keamanan bagi para pemimpin Falintil dan Fretilin ketika mereka memasuki kota.

142. Naldo Gil da Costa, seorang anak lelaki dari satu keluarga prokemerdekaan, berusaha melarikan diri ke hutan ketika ayahnya terbunuh:

*Saya ingin lari ke hutan, tetapi Adjunto Larimau tidak menyetujui permintaan saya dan dia menyarankan, karena saya masih kecil, lebih baik saya belajar dan mencari jalan untuk tetap bekerja bagi Resistansi.**

143. Kemudian, ia mendapat kepercayaan dari para pemimpin Resistansi, termasuk Xanana Gusmão, dan mengambil bagian dalam mengorganisasikan jaringan klandestin di Region Tengah (*Região Centro*). Pada waktu itu Naldo berusia 14 tahun:

Pada 1990, Sabalae memerintahkan saya untuk mengorganisasi sebuah caixa di Ponte Leste... Pada Juni 1991, saya mengantarkan Komandan Xanana ke Lospalos untuk bertemu dengan Falintil di Ponta Leste, bersama-sama dengan Sabalae, Inácio Bernardino alias Adik, Acacio Bernardino alias Moris Nafatin, Americo, dan kakak saya Doben Hadomi Timor.¹²⁰

144. Seorang guru dari Ermera mengungkapkan kepada Komisi bagaimana ia menyuruh anak-anaknya sendiri untuk menjaga keselamatan Konis Santana, ketika pemimpin Resistansi ini tinggal di rumahnya pada 1993:

Pada awalnya, hal ini dirahasiakan dari anak-anak. Tetapi setelah Konis datang untuk tinggal di rumah kami, maka kami harus mengajarkan kepada anak-anak untuk merahasiakannya dan kami memberi mereka tanggung jawab untuk menjadi penjaga keamanan. Tugas mereka adalah menjaga tempat-tempat yang memiliki pemandangan jelas, sehingga mereka bisa mengawasi situasi dengan jelas. Mereka harus berkomunikasi dengan kami dengan menggunakan kode-kode yang telah kami setuju sebelumnya seperti batuk-batuk tiga kali atau berteriak sesuai kode.¹²¹

145. Serupa dengan itu, anak-anak Gil Araújo dari Ainaro diberi tugas menghibur Xanana dan bekerja sebagai pengintai. Di Soibada (Manatuto), Bibrani mengorganisasikan para keponakannya baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga tempat persembunyian Francisco Guterres (Lú-Olo), Virgilio dos Anjos (Ular Rheik), Domingos Raul (Falur Rate Laek), dan Américo Ximenes (Sabica Besi Kulit).[†]

* Naldo Gil da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004. Larimau adalah nama klandestin dari seorang kader politik yang bekerja dengan Falintil di Region I – Lospalos, Lautém.

† Lihat juga UNICEF, halaman 44. Salah satu studi kasus adalah mengenai Luis, yang berusia 10 tahun ketika bergabung dengan gerakan klandestin sebagai *estafeta* dan mata-mata: "Saya harus mencari informasi untuk Falintil. Saya harus mendengarkan pembicaraan orang-orang lain dan melaporkannya kepada kakak saya, Fabio. Ketika melakukan ini, saya takut. Saya mengawasi rumah orang-orang

Kampanye

146. Jaringan klandestin juga terlibat dalam penyebaran informasi, baik di tingkat masyarakat untuk memperluas dukungan bagi gerakan perlawanan, maupun di tingkat internasional untuk membangkitkan kesadaran tentang Timor-Leste. Kampanye umumnya dilakukan oleh kelompok-kelompok orang muda, termasuk pelajar sekolah menengah dan mahasiswa universitas, serta anggota kelompok-kelompok pemuda gereja seperti Mudika. Sebagian orang yang disebutkan di atas sebagai *estafeta* terlibat dalam membangun kegiatan ini di dalam jaringan klandestin.

147. Aquilina Imaculada, misalnya, bergabung dengan jaringan klandestin sebagai seorang *estafeta* dan kemudian menjadi seorang juru kampanye yang terkemuka. Pada 1995, pada usia 17 tahun, ia mengorganisasi beberapa kelompok klandestin di Baucau. Dengan nama klandestin Peregrina, ia menjadi penghubung antara L-7 dan Sagrada Familia, yang merupakan salah satu jaringan klandestin terbesar di Baucau. Kemudian Peregrina beranjak ke pengorganisasian kegiatan kampanye “dari pintu ke pintu” di kalangan pemuda, perempuan, dan orang tua. Metode kampanye ini dilakukan melalui berbagai diskusi rahasia, sering diselenggarakan di acara-acara pesta ulang tahun atau perayaan lainnya untuk menghindari kecurigaan.¹²²

148. Gregório Saldanha, juga seorang *estafeta*, kemudian berlanjut menjadi pemimpin organisasi pemuda klandestin, OJETIL, serta menjadi pengurus Komite Eksekutif dalam Front Klandestin.

149. Kunjungan-kunjungan orang asing pada dasawarsa 1990-an, meskipun terbatas dan diawasi secara ketat, telah membuka peluang baru untuk kampanye. Demonstrasi terbuka, yang biasanya diselenggarakan dan dihadiri aktivis-aktivis pelajar dan pemuda, mulai digunakan sebagai taktik untuk menarik perhatian internasional. Para aktivis menggunakan sejumlah taktik seperti melemparkan batu, bertanya kepada orang-orang Indonesia, “Kapan pulang?,” dan menulis grafiti atau menempelkan berbagai selebaran dan poster antiintegrasi di tempat-tempat umum.¹²³

150. Antara 1989 dan 1999, gerakan kemerdekaan menyelenggarakan setidaknya 60 demonstrasi di Timor-Leste dan Indonesia. Sebagian demonstrasi terjadi secara spontan. Belchior Francisco Bento Alves Pereira menyampaikan kepada Komisi:

Pada 17 Maret 1990, ada kejadian di dekat SMP St. Paulus di Dili. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi pagi hari ketika kami datang di sekolah, bendera dan tali [dari tiang bendera] telah dicuri oleh seseorang. Ada coretan di tembok-tembok sekolah kami. Ada tulisan bahwa integrasi itu tidak baik. Kami tidak memperhatikan tulisan itu

tertentu. Kakak saya menyuruh saya pergi dan melakukan ini dan saya beritahukan kepadanya apa yang mereka bicarakan dan lakukan. Di desa tidak ada pemuda lain yang melakukan pekerjaan ini. Saya juga membawa air dan sayur-mayur untuk Falintil di ladang di belakang desa. Saya pura-pura mau bekerja di ladang. Saya melakukan tugas-tugas klandestin setelah pulang dari sekolah.”

* “Karena aksinya cukup terbuka, strategi ini bisa disebut ‘semi-klandestin’ meskipun aksi-aksi ini direncanakan oleh kelompok-kelompok klandestin.” Vitorino dos Reis, wawancara dengan Gregório Saldanha, *Talitakum* (Dili), No. 38, 25 Maret-1 April 2002, halaman 24-25.

*dan terus belajar. Kemudian, banyak intel [orang-orang yang bekerja secara resmi maupun tidak untuk jaringan intelijen Indonesia] muncul di sekitar sekolah kami, maka kami pun bereaksi. Kami keluar dari sekolah dan melemparkan [benda-benda] ke arah mereka. Saya yang mulai melempar pertama kali. Pada waktu itu saya baru berumur 13 atau 14 tahun.**

151. Akan tetapi, sebagian besar demonstrasi direncanakan secara cermat agar bersamaan waktunya dengan kunjungan internasional. Para aktivis pemuda sering terlibat dalam merencanakan atau menyelenggarakan aksi-aksi ini,[†] tetapi dalam banyak kasus, mereka diarahkan para tokoh senior dalam Resistansi yang mengirimkan instruksi melalui jaringan klandestin. Mateus dos Santos, misalnya, terlibat dalam kegiatan sel klandestin Aleixo Cobra di awal dasawarsa 1990-an dan diberi informasi serta instruksi melalui jaringan ini setiap kali ada rencana demonstrasi.[‡]

152. Demonstrasi terbesar di masa pendudukan terjadi pada 12 November 1991. Demonstrasi ini pada awalnya direncanakan diselenggarakan bertepatan dengan kedatangan suatu delegasi parlemen Portugis yang dijadwalkan pada awal November, tetapi kunjungan ini dibatalkan mendadak pada saat terakhir. Tetapi pada malam hari tanggal 28 Oktober, satu gerombolan penjahat, yang tampaknya didukung oleh anggota-anggota ABRI, menyerang Gereja Motael dan membunuh aktivis prokemerdekaan berusia 18 tahun, Sebastião Gomes. Kemudian direncanakan satu demonstrasi yang diselenggarakan setelah misa peringatan yang akan diadakan pada 12 November, dua minggu setelah penguburan Sebastião dan ketika Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan, Pieter Kooijmans, sedang mengunjungi Dili.

153. João da Silva, seorang pemimpin pemuda di Becora, Dili, ingat bahwa, “semua informasi yang berhubungan dengan setiap aspek persiapan selalu datang melalui jaringan klandestin.”¹²⁴ Constâncio Pinto, dari Komite Eksekutif dalam Front

.....
* Belchior Francisco Bento Alves Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004. Lihat juga boks Bab 7.6: Pengadilan Politik. Dalam satu kejadian lainnya, satu demonstrasi spontan terjadi setelah adanya komentar seorang pejabat Indonesia di sebuah sekolah menengah pertama (SMPN 4) pada 17 Maret 1990. Carolino Soares, yang pada waktu itu berusia 15 tahun, ingat bahwa pejabat itu mengatakan: “Kalau membuat satu batang korek api saja belum bisa, maka Timor-Leste belum bisa merdeka.” Dan kekecewaan kalangan siswa SMPN 4 yang buntutnya muncul reaksi melakukan aksi demonstrasi. Sesaat kemudian satuan Brimob langsung datang ke lokasi kejadian. Dengan kedatangan para Brimob itu, terjadi aksi lempar-melempar antara siswa dan polisi Brimob. Pada saat itu juga ada saudari sepupu saya yang bernama Ana Maria Soares mati karena ditembak polisi Brimob di jalan raya SMPN 4 Dili.” Pernyataan HRVD 00195-1.

† Misalnya, organisasi kependuan Katolik, Escuteiros, berperan penting dalam demonstrasi yang diadakan pada Oktober 1989 di Tacitolu, Dili, saat kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Timor-Leste. Ini adalah demonstrasi besar di depan umum yang pertama sejak invasi. Constâncio Pinto dan Matthew Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle*, halaman 108-109.

‡ Wawancara CAVR dengan Mateus dos Santos, Suai, 31 Oktober 2003. Lihat juga boks mengenai Naldo Gil da Costa pada bagian 7.8.3 Penahanan sewenang-wenang, pembunuhan, dan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Pada Agustus 1992, Xanana Gusmão memintanya untuk mengorganisasi demonstrasi di Dili bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok di Jakarta yang dijadwalkan diselenggarakan pada September 1992.

Klandestin, mengenang bahwa Xanana Gusmão mendukung demonstrasi tersebut, tetapi jelas bahwa para pemimpin pemuda klandestin Dili siap melaksanakan aksi mereka sendiri bila tidak ada keputusan dari atas.

154. Pada akhirnya, banyak anak menebus dengan mahal keterlibatan mereka dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa 12 November atau Pembantaian Santa Cruz. Dari 271 orang yang terdaftar telah terbunuh di Santa Cruz, 42 orang berusia di bawah 17 tahun, termasuk beberapa orang yang masih berusia 10 tahun.¹²⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam bagian selanjutnya, para pelajar secara khusus dijadikan sasaran pasukan keamanan setelah pembantaian di perkuburan Santa Cruz dan Sekolah Externato de São José ditutup tahun berikutnya. Selain membuat Timor-Leste menjadi masalah internasional, Pembantaian 12 November menyuburkan perasaan nasionalis yang bahkan lebih kuat di kalangan orang muda yang telah menyaksikan teman-teman, rekan-rekan mereka di sekolah, dan saudara-saudara laki-laki dan perempuannya dibunuh pada waktu dan setelah pembantaian itu.⁷

155. Bagian penting yang dimainkan oleh pelajar dan pemuda dalam demonstrasi-demonstrasi barangkali bisa dijelaskan dengan adanya kesediaan besar mereka untuk ditahan atau menanggung risiko pribadi lainnya demi perjuangan. Meskipun demikian, sebagaimana bisa dilihat dalam kasus Santa Cruz, keterlibatan mereka sering berdampak pribadi yang berat, berkisar dari dikeluarkan dari sekolah sampai dengan penahanan, penyiksaan, bahkan kematian. Jelas bahwa aparat keamanan memandang demonstrasi sebagai suatu ancaman dan para peserta demonstrasi sebagai sasaran yang layak. Seorang pelajar yang pada waktu itu berumur 15 tahun mengenang:

Saya pertama kali ikut demonstrasi pada waktu kunjungan Duta Besar Amerika Serikat...ke Dili, khususnya ke Hotel Turismo pada 1990. Setelah demonstrasi, kami dikejar oleh aparat keamanan [Indonesia]. Saya lari ke pantai, banyak demonstran dipukuli dan ditangkap di sana...Ketika itu saya memakai seragam SMP, saya kemudian berpura-pura sedang duduk-duduk di pantai, melepaskan sepatu dan bermain-main di air, sampai saya yakin keadaannya sudah aman.¹²⁶

156. Alexandrino da Costa, yang berumur 14 tahun pada 1991, terluka parah dalam demonstrasi di Santa Cruz tetapi kembali ambil bagian dalam demonstrasi lain pada 1995. Ia ditangkap oleh polisi dan militer, dan diancam: “Kamu tidak takut mati, kamu masih ikut demonstrasi?”¹²⁷ Menurut Xanana Gusmão:

Di mata para penyerbu Indo [sic], pemuda tampak sebagai golongan masyarakat yang paling berbahaya.¹²⁸

.....
* Wawancara CAVR dengan João Sarmento, Dili, 5 Juni 2004. João Sarmento, yang pada waktu itu berusia 16 tahun berada dalam jarak 50 meter dari perkuburan ketika penembakan dimulai. Di kemudian hari ia menjadi salah seorang pendiri Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor Timur, yang berperan penting dalam masa menjelang Jajak Pendapat pada Agustus 1999.

157. Dalam bagian-bagian berikut, pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak yang terlibat dalam gerakan perlawanan dibahas lebih terperinci.

Anak-anak dalam Falintil

158. Pemuda berusia 17 tahun ke bawah bergabung dengan Milisi Falintil sejak sebelum invasi sampai hari-hari tepat sebelum Jajak Pendapat pada Agustus 1999. Anak-anak semuda 14 tahun direkrut menjadi milisi sebelum invasi Indonesia dan sebagian dari mereka ini kemudian didaftarkan sebagai anggota tetap Falintil. Dilaporkan bahwa pada 1976 ada anak-anak berusia 13 tahun yang menjadi prajurit Falintil, tetapi kebanyakan anggota anak-anak berumur 15-18 tahun. Usia ini tidak bertentangan dengan Protokol Tambahan 1977 pertama Konvensi-Konvensi Jenewa, yang mengatur umur 15 tahun sebagai umur minimum.* Satu penelitian UNICEF dari tahun 2000 menemukan bahwa sebagian besar, namun tidak semua, prajurit anak dalam Falintil berusia antara 15 dan 18 tahun.¹²⁹ Beberapa mantan tentara anak yang termuda menjelaskan bahwa pertama-tama mereka diberi pekerjaan yang kurang berbahaya dan kemudian mulai ambil bagian dalam operasi-operasi militer setelah beberapa tahun. Sebagian besar tentara anak melaporkan bahwa mereka diperlakukan baik.†

159. Anak-anak termasuk di antara para prajurit tentara yang menyerah atau tertangkap atau terbunuh pada akhir dasawarsa 1970-an, tetapi ada juga anggota Falintil yang direkrut ketika masih anak-anak dan terus berjuang sampai pendudukan Indonesia berakhir. Ketika kekuatan pasukan dan persenjataan Falintil menyusut pada akhir dasawarsa 1970-an, kemungkinan besar jumlah tentara anak menurun. Tetapi, sepanjang dasawarsa 1990-an, remaja kadang-kadang masih bergabung dengan Falintil, termasuk anggota-anggota gerakan bawahan yang melarikan diri dari kota dan desa karena dijadikan sasaran.

160. Selain dihadapkan pada bahaya pada waktu pertempuran, banyak dari para pemuda ini yang mengalami berbagai kesulitan setelah tugas mereka berakhir.

* Protokol Tambahan I tahun 1977 pada Konvensi-Konvensi Jenewa menyatakan, "Para pihak yang terlibat konflik harus menempuh segala langkah yang mungkin agar anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun tidak ambil bagian langsung dalam permusuhan dan khususnya, mereka harus menahan diri untuk tidak merekrut anak-anak ke dalam angkatan bersenjata mereka." (Protokol I, Pasal 77). Satu Protokol Opsional pada Konvensi Hak Anak mulai berlaku pada 2002, yang menaikkan batas usia minimum dari 15 menjadi 18 tahun untuk prajurit yang ambil bagian langsung dalam permusuhan.

† Anak-anak dalam penelitian UNICEF, kebanyakan masih dalam FDTL, menjelaskan bahwa mereka diperlakukan lebih baik oleh Falintil daripada keluarga sendiri. Salah seorang dari mereka mengatakan, "Para komandan memperlakukan kami dengan baik. Mereka membantu kami di saat kami harus bertempur dan mereka memperlakukan kami lebih baik daripada orangtua kami sendiri" (halaman 27). Tetapi ada juga yang menyampaikan tentang penahanan kalau mereka ingin menyerah atau tidak menaati peraturan (lihat Pernyataan HRVD 02160-01 dan 04846-01). Pada 1977, seseorang yang direkrut pada usia 16 tahun bermaksud menyerah, tetapi seorang komandan [C10] memberikan perintah untuk menangkapnya. Ia diikat dan ditahan selama tujuh hari di Gua Batu (Pernyataan HRVD 02160-01). Pernyataan HRVD 04846-01 menyampaikan bahwa pada 1977 seorang prajurit Falintil berusia 16 tahun ditangkap di Bemalae (Manufahi) oleh seorang komandan Fretilin dengan tuduhan menjadi intelijen ABRI. Ia ditahan di rumah kosong tidak beratap dengan penjagaan yang ketat selama satu pekan.

Setelah menyerah atau tertangkap, seperti anggota Falintil yang lebih tua, mereka umumnya menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Mereka yang menjalani demobilisasi setelah bertugas cukup lama dalam Falintil, bisa menghadapi masalah dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sipil.

Perekrutan

1975-1979

161. Bahkan sebelum terjadinya konflik partai-partai politik, lelaki muda, meskipun tidak selalu anak-anak, terlibat dalam Fretilin melalui organisasi keamanan tingkat desanya, Organização Popular de Segurança (OPS, Organisasi Rakyat untuk Keamanan).^{*} Setelah UDT dikalahkan, Fretilin mendirikan milisi yang, khususnya dalam masa menjelang invasi, mencakup anak laki-laki di bawah usia 18 tahun, dan ada sebagian yang berusia di bawah 15 tahun.

162. Sebagai akibat penyusupan lintas-batas oleh ABRI dan pasukan Partisan yang dimulai pada Agustus 1975, Falintil mulai mengorganisasikan milisi berdasarkan instruksi dari Komite Sentral Fretilin.[†] Perekrutan ke dalam milisi ini umumnya bersifat sukarela, namun anak-anak yang direkrut tidak selalu diberikan pemahaman sepenuhnya mengenai risiko keterlibatan mereka. Seorang peserta ingat bahwa semua orang yang berusia 14 tahun ke atas diajak bergabung. Jaime Ribeiro berusia 17 tahun pada waktu itu. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa dirinya melarikan diri dari Bazartete (Liquiçá) ke Tibar (Liquiçá) bersama keluarganya dan direkrut bersama pemuda lainnya ke dalam milisi Falintil:

Pihak keamanan [Falintil] setempat memanggil kami untuk menerima senjata. Tetapi saya tidak tahu apa yang sedang terjadi... [Mereka mengatakan]: "Sekarang negeri kita sudah aman dan kita sudah merdeka. Mulai dari yang berusia 14-15 sampai dengan 18, jika merasa mampu, boleh masuk latihan untuk menjaga keamanan nasional, karena kita sudah merdeka"...

Waktu itu kami milisi, bukan tentara!...Perekrutan pun belum selesai. Tanggal 7 Desember 1975, invasi Indonesia. Kami tidak tahu—kami seharusnya melakukan apa? Tentara [Falintil] pun sekali tembak langsung sembunyi karena tidak tahu harus bagaimana. Problema! Polisi Militer pun melarikan diri sampai senjatanya dibuang. Apalagi milisi!

^{*} OPS adalah kelompok keamanan di tingkat masyarakat yang dibentuk Fretilin sebelum invasi ketika infiltrasi oleh tentara Indonesia dari tapal batas barat sudah dimulai, untuk menjaga keamanan masyarakat setempat.

[†] "Fretilin sudah mempunyai angkatan bersenjata (Falintil) dan garis-garis komando yang jelas di bawah Panglima Nicolau dos Reis Lobato dan wakilnya. Dan ini diperkuat dengan para milisi yang dibentuk oleh CCF [Komite Sentral Fretilin]. Para milisi pada waktu itu dibentuk oleh Camacho secara luas di seluruh wilayah Timor-Leste, yang kemudian menjadi salah satu kekuatan untuk membela kemerdekaan." Wawancara CAVR dengan Eli Foho Rai Boot (Cornelio Gama, L-7), Laga, Baucau, 9 April 2003; lihat juga Bagian 5: Resistansi: Struktur dan Strategi; lihat juga James Dunn, *A People Betrayed*, ABC Books, Sydney, 1996, halaman 128, yang memperlihatkan anak-anak laki-laki yang sedang berlatih dengan menggunakan senapan di kawasan barat pada Oktober 1975.

*Dulu saya mengira bersenjata itu sesuatu yang baik. Ternyata sekarang menghadapi perang! Jika saya tahu sebelumnya, pasti saya tidak akan mau menerima senjata dan sekarang bisa menyelamatkan diri bersama keluarga.**

163. Seperti anggota milisi lainnya, Jaime Ribeiro selanjutnya menjadi anggota Falintil sesudah invasi. L-7 menjelaskan:

Di antara anggota milisi, ada yang menjadi Falintil setelah melalui proses seleksi.¹³⁰

164. Faustino Cardoso Gomes adalah contoh lain tentang seorang anggota milisi yang berlanjut dengan menjadi anggota Falintil. Kepada Komisi ia mengatakan bahwa ia bergabung dengan milisi pada waktu UDT melancarkan gerakan bersenjata 11 Agustus 1975, ketika usianya 15 tahun. Pertama ia bekerja sebagai jurutik yang mencatat pembagian pakaian seragam di satu pangkalan militer di Taibessi (Dili). Ketika tentara Indonesia melakukan invasi, ia pergi ke hutan dan bertugas sebagai prajurit Falintil selama empat tahun sampai tertangkap.¹³¹

165. Sesudah invasi, Fretilin juga merekrut para anggota baru tanpa pengalaman dalam pasukan milisi, termasuk anak-anak dan pemuda.† Dari informasi yang diberikan kepada Komisi, secara umum para anggota baru yang direkrut itu berusia 15 tahun ke atas. Manuel Alves Pereira Morreira ingat mengenai perekrutan orang-orang yang berusia 15 tahun ke atas pada 1976, ketika dirinya menjadi wakil komandan. Ia menjelaskan bahwa perekrutan itu dilakukan berdasarkan instruksi dari para pemimpin Falintil, termasuk Hermenegildo Alves, Wakil Menteri Pertahanan sekaligus sebagai Kepala Staf Umum dan hal itu bersifat sukarela.¹³²

166. Misalnya, perekrutan orang muda dilakukan di Cailalui (Laleia, Manatuto) pada 14 Juni 1976. Menurut seorang yang direkrut pada usia 17 tahun, perekrutan ini dilakukan berdasarkan instruksi langsung Komandan Regional (Comandante Região, pada waktu itu Tomás Anucaí), melalui kepala desa Busa Kuak (Laleia, Manatuto). Sekitar 20 orang muda yang berusia 15 sampai 20 tahun direkrut.¹³³ Manuel dos Reis, yang pada waktu itu berusia 15 tahun, mengingatnya:

Pada 1975 saya lari ke dalam hutan, sampai di satu tempat yang disebut Fatululi. Saya mendapat sepucuk senjata, sebuah Mauser, untuk digunakan berperang.¹³⁴

* Jaime Ribeiro menjadi terkenal dengan nama Samba Sembilan dan bertahan sebagai pejuang Falintil selama 26 tahun, sampai pembentukan FDTL pada 1 Februari 2001. "Samba" berarti ikan, karena gerakannya licin seperti ikan. "Sembilan" adalah angka yang ia peroleh setelah letusan senjatanya berhasil melenyapkan nyawa sembilan lawannya dalam satu operasi militer. (Jaime Ribeiro, *Arsip Proyek Oral History Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No. 9.)

† Pernyataan HRVD 06942 menyebutkan tentang seorang remaja berusia 16 tahun yang menjadi tentara setelah melarikan diri saat terjadinya invasi pada 1976: "Saya melarikan diri ke hutan di wilayah Laclubar [Manatuto] karena takut tentara Indonesia. Di Laclubar saya menerima senjata dari komandan Fretilin untuk ikut dalam mempertahankan tanah air kita melawan ABRI."

167. Namun demikian, Komisi telah menerima sejumlah keterangan langsung dari orang-orang yang direkrut sebagai prajurit Falintil pada saat mereka belum mencapai usia 15 tahun, dan anak-anak ini ingat bahwa ada anak-anak lain seumur mereka yang direkrut. Felix do Rosário berusia 13 tahun ketika direkrut di Alas (Manufahi). Ia mengatakan kepada Komisi bahwa banyak orang yang mengungsi ke hutan bersama Falintil antara 1976 dan 1977 kemudian direkrut untuk berjuang. Siapa saja yang bisa mengangkat senjata direkrut tanpa memandang usia dan banyak anak yang mau bergabung; dengan demikian, ada banyak anak berusia 13 atau 14 tahun yang menjadi prajurit Falintil pada waktu itu.¹³⁵

168. Constâncio Pinto mengatakan bahwa ia bergabung dalam Falintil pada 1977 ketika berusia 13 tahun, dengan izin orangtuanya. Anggota kesatuannya sebagian besar berusia antara 15 dan 18 tahun dan ia mengenal anak-anak lain berumur 12 tahun yang bergabung dengan kakak lelaki atau ayah mereka di garis depan. Remaja perempuan kadang-kadang membawa makanan untuk pejuang, namun mereka jarang ke garis depan. Constâncio menuliskan tentang pengalamannya:

*Ini bukan karena saya ingin membuktikan bahwa saya bukan anak kecil lagi; pada waktu itu saya merasa sudah seperti lelaki dewasa. Perang membuat orang muda sangat cepat menjadi dewasa.*¹³⁶

169. Sebagian orang muda yang direkrut diberi tugas yang kurang berbahaya, walaupun kondisi membuat mereka tidak pernah lepas samasekali dari pertempuran. Ketika Evaristo de Araújo, yang pada waktu itu berusia sekitar delapan tahun, turun dari Gunung Kablaki (Manufahi) bersama keluarganya untuk mencari makanan, ia mengatakan bahwa seorang anggota Linud 100 menembak kakinya. Ia diselamatkan seorang anggota Falintil dan dirawat selama satu tahun:

*Pada sore hari António de Araújo dan Ernesto datang membawakan obat untuk saya...Setelah satu tahun kaki saya sembuh. Kami terus berjuang di Gunung Kablaki dan pada 1977 tentara mulai beroperasi ke Gunung Kablaki. Waktu itu saya memegang senjata untuk berjaga di pos pengamanan.*¹³⁷

170. Tahun 1979, ketika berusia 16 tahun, Evaristo tertembak lagi dan tertangkap.

171. Ada suatu pola yang serupa dalam kasus penelitian UNICEF dari dasawarsa 1980-an, di mana para prajurit termuda diberi tugas yang kurang berbahaya tetapi kadang-kadang masih ambil bagian dalam operasi menyerang maupun bertahan.

172. Orang-orang yang memiliki keterampilan cepat dipromosikan, tanpa pandang usia. Gabriel Ximenes adalah seorang guru pemberantasan buta huruf yang berusia 17 tahun ketika bergabung dengan Falintil setelah invasi:

Ketika musuh menginvasi masuk di Ermera pada 1976, saya telah berusia 17 tahun, bersama keluarga evakuasi ke hutan. Di hutan kami tinggal di wilayah Fatubesi. Kemudian saya menggabungkan diri dengan pasukan Fretilin, memegang senjata berperang melawan musuh.

*Tak lama kemudian pada 1977, komandan sektor tengah barat Ermera mengangkat saya menjadi komandan peleton untuk daerah perbatasan bagian utara. Setelah menduduki posisi demikian saya memimpin pasukan satu peleton dengan kekuatan senjata 100 pucuk.**

173. Sementara sebagian besar mantan gerilyawan anak mengatakan bahwa partisipasi mereka itu sukarela, seorang deponen melaporkan bahwa dirinya direkrut secara paksa ketika berusia 17 tahun pada 1976:

Pada 1975 ketika kami lari ke hutan dan dengar bahwa tentara Indonesia masuk di Timor-Leste, ada teman kami yang seumur—dia sudah sebagai komandan—yang memaksa saya masuk anggota Fretilin untuk menjaga malam. Ketika itu mereka menyuruh Fretilin lain menangkap saya untuk masuk anggota Fretilin. Setelah itu membawa saya ke asrama militer, lalu mereka serahkan senjata kepada saya untuk menjadi anggota. Waktu itu saya belum tahu memegang senjata, lalu saya memencet [pelatuk] pada waktu di tempat penjagaan dan akhirnya senjata itu bunyi, maka mereka datang menangkap saya, dan menghukum saya dengan mengikat saya dari malam hingga jam empat pagi baru mereka lepas saya. Yang datang menangkap saya adalah dari komando militer Fretilin. Tangkap saya di Nakroman [Lacluta, Viqueque]. Mereka mengambil kembali senjata dari saya dan diserahkan pada teman lain, lalu saya mereka suruh untuk mencari makanan.†

174. Reorganisasi yang terjadi setelah pertemuan Komite Sentral Fretilin di Soibada (Manatuto) pada April-Mei 1976 membentuk tiga kekuatan utama: Pasukan Tempur (Forças de Sector), Pasukan Pertahanan Diri (Força Auto-Defesa, FAD) dan pasukan bersenjata tajam tradisional (*Armas Brancas*). Komisi tidak menerima informasi bahwa anak-anak dimasukkan dalam konsep “pertahanan rakyat” yang diterapkan oleh Fretilin dari zona turun sampai ke tingkat *aldeia*. Menurut Virgílio Guterres, seorang mantan aktivis, *Armas Brancas* mencakup semua orang yang berusia 17 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bagian dari konsep “perang rakyat”‡

* Wawancara CAVR dengan Gabriel Ximenes, Ermera, 13 Agustus 2003. Ia menyerah kepada Batalion 611 pada 1979 bersama dengan satu kelompok besar sesudah terjadinya konflik antar-Fretilin dan selama beberapa bulan mengalami kelaparan di Fatubesi dan Ermera. Sesiudah diizinkan pulang, ia ditahan oleh ABRI dan Hansip dalam suatu kelompok yang terdiri atas 100 orang dari Ermera, Sakoko dan Ponilala dan dipindahkan untuk membuka lahan baru selama empat tahun di suatu tempat yang di masa selanjutnya menjadi kota Gleno.

† Pernyataan HRVD 04845. Satu Profil Komunitas dari desa Clacuok, Welaluhu, Fatuberliu, Manufahi, 10 Februari 2004, melaporkan bahwa pada tahun 1981, “anak-anak ditangkap Falintil untuk ronda, namun tidak pernah kembali.”

‡ Wawancara CAVR dengan Virgílio da Silva Guterres, Dili, 25 Mei 2004: “Semua orang berusia di atas 17 tahun, tanpa memandang jenis kelamin maupun kedudukan apapun, dikenai kewajiban jaga malam. Yang kena kewajiban ini adalah setiap orang, bukan setiap keluarga. Termasuk yang terkena kewajiban

1980-1989

Saat pertama kali bergabung dengan Falintil [pada 1983], saya melihat banyak anak muda yang berusia di bawah 18 tahun, tetapi banyak dari mereka yang terbunuh dan kini hanya sedikit dari kami yang tersisa.¹³⁸

175. Pada awal dasawarsa 1980-an, Falintil terus merekrut prajurit berusia di bawah 18 tahun. penelitian UNICEF meliputi kasus seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Bersama, yang dibawa oleh Falintil setelah ayahnya, seorang pemimpin klandestin, dibunuh di hutan oleh tentara Indonesia. Komandan Ular mengingat: “Tidak ada pilihan pada waktu itu. Kami tidak bisa meninggalkan Bersama ketika kami mundur.”¹³⁹ Bersama diberi tugas pertama menulis daftar dan inventaris, selanjutnya menulis surat-surat dan catatan sejarah perang. Setelah dua tahun, ia juga mulai ambil bagian dalam operasi pertempuran:

Saya tidak memegang senjata ketika pertama kali bergabung dengan Falintil... Tugas saya adalah untuk bersembunyi, bukan bertempur. Saya secara resmi bergabung dengan Falintil pada 1987 dan sebelum itu saya sudah pernah membawa senjata. Orang-orang yang dapat menggunakan senjata bisa mengambil senjata dari Falintil, sekaligus masuk ke dalam Falintil. Saya berumur 14 tahun saat pertama kali memegang senjata. Pada waktu itu ayah saya sakit, jadi saya harus menggantikannya. Senjata pertama saya adalah sepucuk FBP [senapan kecil]. Prajurit-prajurit lainnya mau mengambil senjata itu dari saya, namun saya tidak mau memberikannya kepada mereka dan saya katakan kepada mereka bahwa saya sangat menyukai senjata ini!

Ketika saya harus bertempur, saya tidak maju ke garis depan karena walaupun senang memegang senjata, saya waktu itu takut, jadi saya tetap di belakang dan membantu [mereka dengan] berteriak dan berseru!... Mereka meminta pemuda untuk bersembunyi bila kelompok kami terlibat dalam pertempuran – tapi bila musuh lebih kuat daripada kami, masing-masing dari kami harus mencari cara untuk menyelamatkan diri.¹⁴⁰

176. Ada berbagai indikasi bahwa pada dasawarsa 1980-an, ketika tenaga manusia dan peralatan sedang berada di titik terendah, Falintil menolak anak-anak yang ingin bergabung. Menurut Komandan Ular, pada pertengahan dasawarsa 1980-an, Falintil tidak mau banyak orang muda masuk ke dalam pasukan Falintil karena tiga alasan:

jaga malam adalah Secretário da Zona dan Adjunto, orang-orang tertinggi dalam struktur pemerintah dan partai. Dalam satu malam tugas jaga digilir dalam dua kali.”

1. Strategi perang gerilya yang sedang dijalankan waktu akan efektif bila dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil;
2. Pemuda kota jarang yang cukup kuat untuk menanggung kondisi hidup di pergunungan; dan
3. Lebih penting bagi Timor-Leste masa depan yang merdeka jika anak-anak tetap bersekolah.¹⁴¹

177. Sebagai contoh, Naldo Gil Da Costa mengatakan kepada Komisi bahwa setelah Yonif 503 membunuh ayahnya, José da Costa, pada 3 Maret 1985, ia berusaha masuk Falintil, namun gagal:

Waktu saya lari ke hutan saya bertemu dengan Falintil Adjunto Larimau. Kemudian saya tanya kepada Larimau kalau boleh saya tinggal bersama dengannya, tetapi Larimau mengatakan umur saya masih kecil dan perlu sekolah untuk memperjuangkan Resistansi. Tetapi saya tetap berprinsip bahwa saya harus bekerja untuk Falintil demi kemerdekaan Timor-Leste.¹⁴²

1990-1999

178. Pada dasawarsa 1990-an terjadi peningkatan penolakan terhadap pemerintah pendudukan Indonesia melalui demonstrasi publik, yang sering diorganisasikan atau dihadiri kelompok-kelompok pemuda dan pelajar Timor-Leste. Respons militer Indonesia menyebabkan banyak orang muda yang melarikan diri ke hutan. Sebagian dari mereka menjadi prajurit gerilya, sedangkan yang lainnya hanya tinggal bersama Falintil sampai merasa aman untuk kembali.¹⁴³ Julio José Exposto Gago adalah pelajar kelas terakhir sekolah menengah pertama di Hatolia (Ermera), ketika ia ambil bagian dalam demonstrasi Santa Cruz (Dili). Pada saat kembali ke Hatolia dari Dili, ia ditangkap dan diminta menjelaskan ketidakhadirannya di sekolah. Kemudian ia melarikan diri ke hutan. Julio José memperkirakan bahwa sekitar 70 orang bergabung dengan Falintil sebagai akibat dari penumpasan setelah Pembantaian Santa Cruz; semuanya, kecuali satu orang, adalah orang muda, meskipun tidak jelas berapa banyak dari mereka yang berusia di bawah 18 tahun.¹⁴⁴

179. Laporan UNICEF mengenai anak-anak Timor-Leste dalam konflik bersenjata mencatat bahwa Mausina diterima sebagai prajurit pada 20 Agustus 1999 pada waktu berusia 17 tahun—ini adalah perekrutan terakhir di Region II sebelum Jajak Pendapat. Ia adalah satu dari banyak pemuda yang melarikan diri ke wilayah-wilayah Falintil ketika kekerasan meluas pada 1999. Ia menjelaskan:

Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi Falintil sebelum saya bergabung dengan gerakan klandestin, tapi setelah beberapa waktu bekerja untuk kelompok-kelompok bawahan, saya putuskan bahwa saya mau menjadi prajurit Falintil. Saya sudah pernah berhubungan dengan Falintil sebelum saya mendatangi mereka.

Pada waktu itu saya dengar bahwa Falintil memerlukan pemuda untuk bekerja bersama mereka dan itu merupakan satu alasan tambahan yang kuat untuk bergabung.¹⁴⁵

Latihan

180. Jumlah dan jenis latihan yang disediakan bagi prajurit anak dalam Resistansi sangat berbeda-beda. Beberapa mantan prajurit anak menyatakan bahwa mereka mendapatkan latihan dalam milisi maupun Falintil. Misalnya, Joaquim Simião mengatakan bahwa setelah direkrut pada 1976, ia bertemu dengan Komandan Regional dan diberi sepucuk senjata serta latihan. Ia mendapatkan latihan tempur mengenai bagaimana cara menggunakan senjata, bagaimana berlari, dan bagaimana bersembunyi. Setelah itu ia segera dikirim untuk bertempur di Manatuto. Joaquim menjelaskan bahwa orang muda direkrut untuk menggantikan anggota-anggota yang dianggap sudah terlalu tua.¹⁴⁶

181. Namun demikian, sebagian lainnya mengatakan bahwa satu-satunya latihan yang mereka dapatkan adalah melalui pengalaman. Beberapa mantan prajurit anak yang diwawancarai UNICEF menekankan bahwa mereka hanya mendapatkan sedikit latihan sebelum pengalaman pertempuran mereka yang pertama:

Saya tidak pernah mendapat latihan militer apapun sebelumnya. Ketika saya menembak ke arah musuh untuk pertama kalinya, itulah latihan bagi saya... Saya selalu ketakutan ketika pertama kali masuk ke hutan, tapi setelah satu tahun, saya tidak merasa takut lagi, karena saya pikir walaupun kami takut, tidak ada tempat lain bagi kami untuk pergi. Inilah tanah kami.¹⁴⁷

Saya tidak pernah mendapatkan latihan militer apapun—satu-satunya latihan yang saya dapat adalah bagaimana membersihkan senjata, membongkar bagian-bagiannya, dan memasangkan kembali. Satu-satunya yang saya diajari Falintil tentang bertempur adalah “kalau kamu melihat musuh, tembak dia. Kalau kamu tidak menembaknya, kamu akan dibunuh.”¹⁴⁸

182. Dari para komandan mereka, anak-anak juga belajar tentang politik dan hak asasi manusia, termasuk tentang perlindungan untuk penduduk sipil. Felix do Rosário mengisahkan kepada Komisi bahwa ketika direkrut Komandan Manuel Adão di Labok (Alas, Manufahi) di usia 13 tahun pada 1977, ia mendapatkan instruksi politik dari seorang anggota Komite Sentral Fretilin. Ia juga diberi kesempatan untuk bersekolah guna belajar membaca dan menulis.¹⁴⁹

Risiko bergabung dengan Falintil

183. Seperti semua anggota Falintil lainnya, anak-anak adalah petempur dan karena itu merupakan sasaran militer yang sah. Mereka bukan hanya menghadapi risiko

terluka parah, tetapi juga kematian. Kondisi kehidupan mereka ekstrem dan tidak berbeda dengan kondisi hidup orang-orang dewasa yang bersama mereka. Satu pernyataan yang diambil CAVR mengungkapkan mengenai seorang prajurit berusia 15 tahun yang tertembak dan terbunuh secara tidak sengaja oleh pihaknya sendiri saat berlangsungnya invasi.¹⁵⁰ Cisto Fernandes (Helio Espirito Santo) direkrut oleh markas Falintil di Bika Lari di wilayah Subdistrik Uatolari (Viqueque, Zona 17 de Agosto) saat berusia 15 tahun dan mengikuti berbagai operasi militer sejak 1975. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa dirinya tidak dipaksa ambil bagian, melainkan lebih karena berminat pada agenda politik Fretilin. Pada 1978, lengan kanannya terluka parah saat sepucuk granat meledak sebelum waktunya. Ia diungsikan oleh Falintil dan dirawat di Osoleru (Quelicaí, Baucau).¹⁵¹

184. Risiko-risiko yang dihadapi sesudah ditangkap tentara Indonesia cukup berat. Ini meliputi eksekusi, ditahan, dijadikan sasaran penganiayaan fisik dan mental, serta penyiksaan dan direkrut paksa sebagai TBO.*

185. Menyerah juga ada risikonya. Dalam satu kasus, Manuel dos Reis menjelaskan bagaimana pada 1 November 1978 ia menyerah di Hauba (Bobonaro, Bobonaro) sesudah ditahan Fretilin selama tujuh hari karena dicurigai berencana menyerah. Ia kemudian ditangkap ABRI, diinterogasi, dan dipukuli, sebelum dibawa ke Koramil di Bobonaro dan ditahan di sana selama tiga bulan lagi. Setelah dilepaskan, ia menjadi TBO dan mengikuti satu operasi di Hedalau (Cailaco, Bobonaro). Dalam operasi ini, ia ditembak oleh Falintil bersama dengan beberapa orang Timor-Leste lain anggota militer Indonesia dan terluka parah.[†]

186. Felix do Rosário menguraikan bagaimana setelah kehancuran basis-basis Resistansi, Komite Sentral Fretilin dan para komandan senior Falintil menginstruksikan para anggota Falintil dan Fretilin serta masyarakat yang masih tinggal di hutan untuk mengambil langkah apapun yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan diri, termasuk menyerah. Ia menyerah pada 13 September 1979 bersama dengan para gerilyawan lainnya dan kemudian ditangkap. Ia dihukum atas keanggotaannya dalam Falintil dengan dipaksa membersihkan jalan-jalan di Same dan bekerja dalam pembangunan jalan raya Ainaro-Alas. Ia juga dimasukkan ke sebuah tangki yang diisi air kotor dan ular. Hukumannya berlangsung selama satu tahun, sampai Komite Palang Merah Internasional (ICRC) turun tangan menyelamatkannya.¹⁵²

Demobilisasi dan perubahan menjadi FDTL

187. Tidak diketahui berapa banyak dari sekitar 750 orang prajurit Falintil yang ditempatkan di Aileu pada November 1999 yang berusia di bawah 18 tahun. Pada 2001 Falintil didemobilisasi dan dibentuk Angkatan Pertahanan Timor-Leste (Força Defesa de Timor-Leste, FDTL) dengan batas usia minimum 18 tahun untuk keanggotaannya.

* Misalnya, kasus awal Faustino Cardoso Gomes yang dijadikan seorang TBO sesudah ia ditangkap ketika bertempur bersama Falintil. Wawancara CAVR dengan Faustino Cardoso Gomes, Dili, tidak bertanggung.

† Pernyataan HRVD 02160-01; Pernyataan HRVD 03758 mencakup suatu kejadian di mana deponen dan seorang anggota Falintil yang berusia 15 tahun ditangkap pada November 1979 di Haefu-Madabenu (Ermera), kemudian diikat, dipukul, disundut dengan rokok, dan dibawa untuk dibunuh. Sampai di tengah jalan deponen berhasil meloloskan diri, tetapi akhirnya ditangkap kembali bersama penduduk sipil oleh ABRI.

Seorang mantan tentara anak mengatakan kepada UNICEF bahwa:

Usia yang baik untuk masuk ketentaraan adalah di atas 18 tahun, karena anggota yang baru direkrut, yang berusia di bawah 18 tahun, masih anak-anak dan mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri secara benar.¹⁵³

188. Seperti para mantan anggota gerakan klandestin, banyak mantan anggota Falintil tidak memperoleh pendidikan yang cukup. Dalam pesannya kepada pemuda Katolik di Timor-Leste dan Indonesia pada Mei 1986, Xanana Gusmão menyebutkan tentang para gerilyawan yang “banyak dari mereka seusia kalian dan belum pernah duduk di bangku sekolah.”¹⁵⁴ Akibatnya sekarang mereka tidak memiliki pendidikan atau keahlian yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan di Timor-Leste yang baru merdeka. Sebagian mungkin mendapatkan cedera semasa di hutan, yang membatasi jenis pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Kisah Annas Nasution adalah contoh mengenai ini. Dulunya ia adalah anggota anak-anak dalam gerakan klandestin dan sejak 1995 menjadi anggota Falintil. Walaupun kemudian melamar untuk masuk FDTL, ia tidak terpilih. Kini ia mengatakan:

Saya memutuskan untuk selamanya tinggal di Timor-Leste. Tetapi, masih ragu-ragu karena sampai saat ini saya belum punya tempat tinggal yang sah, sementara saya sudah berkeluarga. Saat ini saya tidak bisa bekerja berat karena sering sakit terutama berak darah. Dengan keadaan seperti ini, saya sering menangis memikirkannya, kadang sampai stres...Semuanya serba sulit. Saya mencoba melamar pekerjaan ke sana ke mari walaupun sebagai security, namun hasilnya tetap nihil.¹⁵⁵

Penahanan sewenang-wenang, pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak

Penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang

Pendahuluan

189. Penahanan anak-anak dilakukan semua pihak yang terlibat dalam konflik politik di Timor-Leste dan berlangsung dalam seluruh periode mandat Komisi.

190. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang atau tidak sah serta penyiksaan telah dibahas lebih mendalam dalam Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan. Ketentuan-ketentuan tersebut juga berlaku bagi anak-anak. Namun demikian, sebagaimana disebutkan di atas berkenaan

dengan anak-anak, para pihak diwajibkan memberikan perlindungan tambahan kepada anak-anak oleh hukum internasional maupun dan untuk kasus Indonesia, oleh hukum dalam negeri. Sebagian besar dari perlindungan ini bersifat umum, yang mensyaratkan, misalnya, agar anak-anak diperlakukan secara berperikemanusiaan dalam keadaan apapun dan agar hak mereka untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi dihormati. Sedangkan mengenai penangkapan, penahanan, dan penyiksaan, kewajiban para pihak kepada anak-anak sama dengan kewajiban mereka kepada orang dewasa. Akan tetapi, sebagai akibat dari ratifikasi oleh Indonesia atas Konvensi Hak Anak pada 5 September 1990, Indonesia mengemban kewajiban-kewajiban tambahan yang berkaitan dengan penahanan anak-anak.

191. Oleh karena itu, ketika hendak mencabut kebebasan seorang anak, Indonesia terikat untuk mengingat kebutuhan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam tindakannya (Pasal 3 [1]). Kewajiban Indonesia berdasarkan Pasal 37 Konvensi ini adalah menjamin agar tidak ada anak yang dirampas kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, ataupun pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai suatu langkah pilihan terakhir serta hanya untuk jangka waktu yang paling singkat. Setiap anak yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan dengan berperikemanusiaan dan penghormatan pada martabat yang melekat dalam pribadi manusia dan dengan cara yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seumur itu. Yang lebih umum, berdasarkan Pasal 38, Indonesia diwajibkan “mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin perlindungan dan pengasuhan anak-anak yang terkena oleh suatu konflik bersenjata”. Berdasarkan Pasal 39, Indonesia wajib membantu pemulihan fisik dan kejiwaan serta reintegrasi sosial anak-anak korban konflik, bukannya memperburuk keadaan mereka dengan penangkapan, penahanan, ataupun penyiksaan.

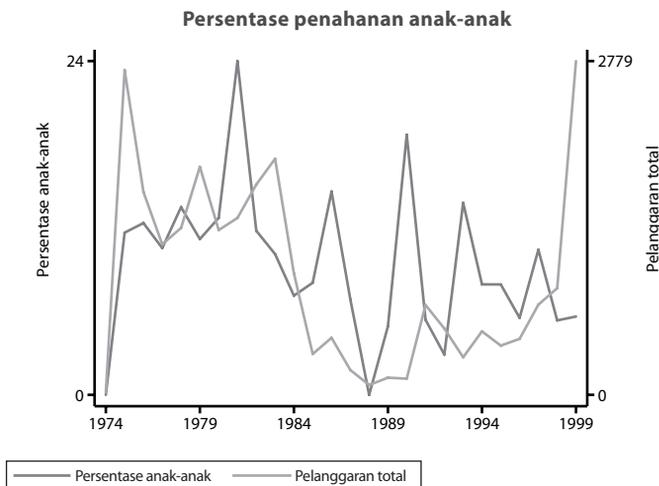
Pola penahanan anak-anak

192. Dalam masa konflik antarpantai, baik UDT maupun Fretilin menahan pendukung muda pihak lawannya, serta anak di bawah umur yang merupakan anggota keluarga pendukung itu. Dari penahanan anak di bawah umur yang dilaporkan kepada Komisi, 2,9% (42/1.426) dilakukan oleh UDT sementara 11,3% (161/1.426) dilakukan oleh pasukan Fretilin dan Falintil. Angka tersebut mencakup kurun waktu 1975-1979, ketika Fretilin memegang kendali atas wilayah dan penduduknya. Dalam kurun waktu itu, Fretilin menahan anak-anak, baik sendirian maupun bersama anggota keluarga, karena pelanggaran terhadap peraturan Fretilin atau karena dicurigai bekerjasama dengan pihak Indonesia.

193. Pihak berwenang Indonesia bertanggung jawab untuk mayoritas sangat besar penangkapan dan penahanan anak-anak di bawah umur. Dari penahanan anak-anak di bawah umur yang dilaporkan kepada Komisi, 73% (1.043/1.426) dilakukan oleh tentara Indonesia. Tentara Indonesia umumnya menahan anak-anak karena satu dari dua alasan: karena mereka atau keluarga mereka dicurigai menjalin hubungan dengan anggota-anggota Fretilin/Falintil yang masih berada di hutan; atau khususnya dalam tahun-tahun belakangan, karena keterlibatan mereka dalam kegiatan bawahanah.

194. Komisi menerima sedikit sekali laporan mengenai penyiksaan anak-anak di bawah umur oleh UDT ataupun Fretilin, walaupun anak-anak banyak ditempatkan dalam kondisi yang sangat keras. Tetapi, pihak berwenang Indonesia secara teratur menggunakan penyiksaan dan memperlakukan dengan buruk anak-anak selama masa pendudukan.

195. Dalam analisis kuantitatif Komisi mengenai laporan-laporan naratif tentang penahanan sewenang-wenang, 45,1% (38.910/86.263) kasus menyebutkan umur korban. Ada 1.426 kasus jelas penahanan anak-anak di bawah umur. Gambar di bawah ini menunjukkan jumlah besar penahanan anak-anak sepanjang akhir dasawarsa 1970-an, mencapai puncaknya untuk anak lelaki dan perempuan pada 1981.* Puncak ini mencerminkan meningkatnya pengumpulan pernyataan mengenai penahanan seluruh keluarga di pulau Ataúro yang dimulai pada periode itu.† Pelanggaran yang dilaporkan menurun ke tingkat yang rendah setelah tahun 1981, dengan puncak-puncak kecil pada 1986 dan 1991, sebelum meningkat lagi pada 1997-1998, dan akhirnya pada 1999 kembali ke tingkat seperti dasawarsa 1970-an. (Lihat grafik: Penahanan Sewenang-wenang yang dilaporkan terhadap Korban Anak secara Lintas-Waktu.)

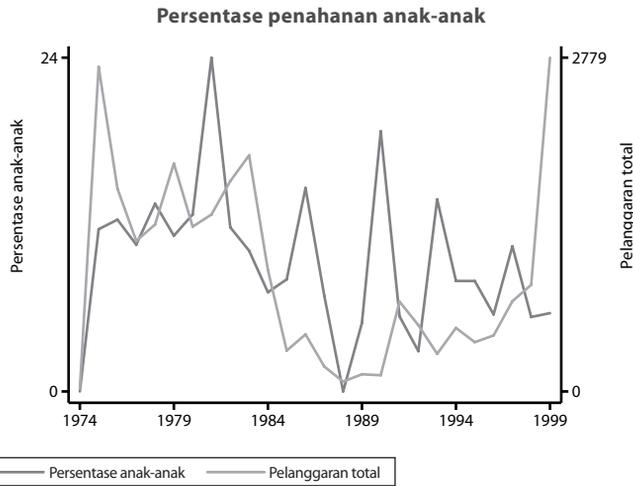


Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
 Catatan: 0,0% pelanggaran tak memiliki data tahun, dan 72,4% tak memiliki data umur korban

196. Seperti yang bisa dilihat pada grafik penahanan terhadap anak di bawah ini mayoritas penahanan anak-anak di bawah umur terjadi antara 1975 dan 1983 dan pada 1999. Sementara penyiksaan terhadap anak-anak di bawah umur kebanyakan terpusat pada 1999, seperti yang bisa dilihat pada grafik pola penyiksaan di bawah ini.

* Penahanan penduduk umum memuncak pada 1982 sesudah serangan terhadap Mau Chiga dan ada satu puncak yang kurang terkenal pada 1980 sesudah jatuhnya Matebian.

† Puncak tahun 1981 mungkin terkait dengan Operasi Keamanan atau mungkin saja hanya merupakan hasil dari kegiatan pengumpulan data.



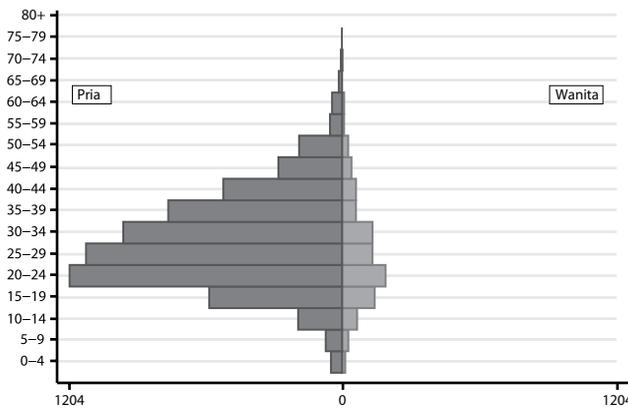
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
 Catatan: 0,0% pelanggaran tak memiliki data tahun, dan 72,4% tak memiliki data umur korban



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

197. Dari anak-anak yang ditahan, anak-anak berumur belasan tahun adalah yang paling sering dilaporkan menjadi korban yang didokumentasikan oleh Komisi. Seperti ditunjukkan angka di bawah, sejauh ini kelompok umur korban penahanan yang terbesar adalah kelompok umur 20-24 tahun dan orang-orang yang berumur antara 15 dan 19 tahun hanyalah kelompok umur korban terbesar kelima.

Jumlah tindak penahanan yang dilaporkan, berdasarkan umur dan jenis kelamin, 1974 – 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
 Catatan: 47,8% catatan tak memiliki data umur ataupun jenis kelamin korban

198. Anak-anak (orang yang berusia 17 tahun atau di bawahnya) membentuk 5,2% (577/11.135) dari kasus penyiksaan dan 5,6% (1.426/25.383) dari insiden penahanan sewenang-wenang dan penculikan.* Kebanyakan anggota kelompok ini berusia 12-17 tahun (tiga per empat dari korban penyiksaan dan dua per tiga penahanan anak di bawah umur adalah kelompok umur ini). Umur rata-rata tahanan dari 1.426 kasus anak-anak korban penahanan adalah 12, dengan usia 14 sebagai median.†

199. Laki-laki merupakan mayoritas terbesar dari korban dalam kedua kategori ini dan karena itu distribusi usia korban laki-laki lebih-kurang mencerminkan keseluruhan distribusi usia dari semua korban penyiksaan di bawah umur dan korban penahanan di bawah umur. Sebagaimana dalam kasus pembunuhan, korban perempuan sedikit lebih muda dari pada yang laki-laki dalam kedua kelompok, dengan anak-anak terhitung merupakan 12% (108/857) dari semua perempuan korban penyiksaan dan 11,6% (408/3.521) dari perempuan korban penahanan, yang sekali lagi kebanyakan berusia 12-17 tahun. Dalam kasus penahanan perempuan, gadis-gadis berusia 12-17 tahun adalah kelompok terbesar keempat, di belakang tiga kelompok berusia 18-35 tahun.‡

* Banyak entri dalam basis data tidak memiliki informasinya yang lengkap mengenai umur, atau tidak ada informasi apapun tentang umur, sehingga tidak dimasukkan dalam analisis ini.

† Statistik-statistik ini didasarkan pada data dari Human Rights Violation Database (HRVD, Basisdata Pelanggaran Hak Asasi Manusia) CAVR.

‡ Romesh Silva, *Sex-Age Distributions of Victims of Reported Human Rights Violation* [Distribusi Jenis Kelamin dan Usia dari Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dilaporkan], HRVD CAVR, 21 Mei 2004. Distribusi frekuensi ini hanya menunjukkan distribusi usia dan jenis kelamin para korban yang informasi tentang usianya dilaporkan kepada Komisi sebagai bagian dari proses pengambilan pernyataan. Laporan usia untuk masing-masing korban dihitung dari usia sebenarnya yang dilaporkan kepada petugas pengambil pernyataan Komisi atau, kalau ini belum ditranskripsi/dikodifikasi ke dalam HRVD, disimpulkan dari informasi tanggal kelahiran korban dan tanggal pelanggaran yang dilaporkan.

200. Dili menunjukkan laporan tertinggi kejadian penahanan sewenang-wenang terhadap orang di bawah umur yang jumlahnya 18,0% (257/1.426) dari penahanan orang di bawah umur, kemudian disusul Bobonaro 14% (203/1.426)], Lautém 13,3% (189/1.426), dan Baucau 11,2% (160/1.426).

Penahanan oleh pihak berwenang Indonesia

1975-1979

201. Pada tahun-tahun awal setelah invasi Indonesia, pihak berwenang Indonesia menahan anak-anak dengan berbagai alasan, tetapi biasanya bersama dengan keluarga mereka. Banyak kasus penahanan anak-anak yang dilaporkan kepada Komisi dari periode ini berkaitan dengan pemusatan orang-orang sipil yang baru ditangkap atau menyerah untuk mengisolasi mereka dari orang-orang yang masih berada di hutan.

202. Mayoritas besar orang, termasuk anak-anak, yang menyerah atau tertangkap dalam periode ini, ditahan di berbagai jenis kamp, di mana mereka dikenai banyak sekali pembatasan atas kebebasan gerak mereka (diuraikan secara terperinci dalam Bab 7.3: Pindahan paksa dan kelaparan). Namun demikian, sebagian orang termasuk anak-anak, dipisahkan dari orang-orang lain yang menyerah dan ditempatkan di tempat penahanan. Dalam satu kasus seperti itu, Pedro Alexandre Belo melaporkan bahwa ketika ia berusia 16 tahun ia bersama anggota-anggota keluarganya ditangkap oleh ABRI di hutan pada 11 Agustus 1976. Mereka ditahan di Hotel Flamboyant di Baucau. Pedro disiksa selama beberapa minggu dan kemudian ditahan selama enam bulan.¹⁵⁶ Damião da Silveiro dari Lupal (Lolotoe, Bobonaro) melaporkan kepada Komisi bahwa ketika berumur 12 tahun, ia ditangkap bersama satu kelompok besar pada 7 Mei 1978 oleh Yonif 131. Ia ditahan selama tujuh bulan di Koramil Lolotoe (Bobonaro), di mana ia dipaksa bekerja di proyek pembangunan sebuah gedung.¹⁵⁷ Igidio Corte Real, berusia 16 tahun ketika menyerah di Letefoho (Same, Manufahi) pada 25 Agustus 1979. Ia ditahan oleh seorang anggota ABRI dan tiga orang anggota Hansip selama 14 hari dan dipukuli.¹⁵⁸

203. Sebagaimana yang telah disebutkan, gerilyawan anak termasuk yang ditahan dan disiksa setelah menyerah. Dalam satu kasus, José da Conceição Carvalho, seorang anggota Falintil berumur 15 tahun, menyerah di Dili pada 1977. Ia ditahan selama 12 hari oleh dua orang anggota intelijen, C11 (orang Indonesia) dan C12 (orang Timor-Leste), karena tidak membawa senjatanya ketika menyerah. Ia dilepaskan setelah memberitahukan tempat senjata itu.¹⁵⁹

204. Selain anak-anak yang ditahan ketika menyerah atau tertangkap, anak-anak juga ditahan ketika anggota keluarganya ditangkap dalam periode ini. Sonia, seorang anak berumur satu tahun dari Quelicai (Baucau) ditahan bersama ibunya, Domingas Morreira, pada 1 November 1976. Mereka ditahan di Hotel Flamboyant, Baucau kota, selama satu minggu di dalam satu sel gelap sebelum diinterogasi mengenai kegiatan Domingas selama di hutan. Mereka akhirnya dilepaskan pada 4 Mei 1978 dengan perintah wajib lapor setiap minggu.¹⁶⁰

205. Pihak berwenang Indonesia membunuh setidaknya seorang anak dalam penahanan pada periode ini: Jaquiel da Costa Ximenes melaporkan tentang seorang anak berumur empat tahun, Joaquim Ximenes, dari satu keluarga yang beranggotakan tujuh orang, ditahan di Afaça (Quelicai, Baucau) pada 14 April 1979. Menurut Jaquiel, Joaquim dipukuli sampai mati dalam penahanan oleh anggota-anggota Yonif 321 dan Sukarelawan (suatu pasukan yang terdiri atas orang Timor-Leste mantan partisan).¹⁶¹

206. Dalam kasus-kasus lain, orang-orang dewasa yang ditahan bersama anak-anak mereka dibunuh dalam penahanan, setelah itu anak-anak tersebut ditempatkan dalam penahanan atau dilepaskan. José Pereira melaporkan bahwa ketika ia berumur 12 tahun, di Babulu (Same, Manufahi) pada 1976, ia dipanggil bersama lima orang dewasa untuk membantu mengangkut beras di Kodim Same. Saat tiba di sana, mereka dituduh telah bekerja bersama Fretilin dan kelima orang dewasa itu dieksekusi. José ditahan dalam satu sel di Kodim selama sembilan bulan, di mana ia diancam, ditanyai, dan dipaksa bekerja di lahan-lahan basis militer itu.¹⁶² Duarte Ximenes mengungkapkan bahwa pada 1979, seorang anak laki-laki berumur 10 tahun, Domingos Ximenes, ditangkap bersama ayahnya oleh ABRI di Tequinomata (Laga, Baucau). Militer membawa mereka ke Quelicai (Baucau). Ayahnya dibunuh sedang Domingos dikembalikan kepada keluarganya.¹⁶³

207. Anak-anak juga ditahan untuk tujuan mengumpulkan informasi mengenai orang lain. Juliana de Jesus menyampaikan kepada Komisi bahwa pada 20 Oktober 1979, ketika berumur 11 tahun, ia ditahan dua kali di pos Yonif 745 di Liurai, Fuiluro (Lospalos, Lautém) bersama dengan saudara perempuannya dan seorang anak laki-laki lain. Mereka diinterogasi mengenai seorang lelaki setempat yang dituduh telah menghubungi anak laki-lakinya, seorang anggota Falintil.¹⁶⁴

208. Pihak penguasa Indonesia menangkap seluruh keluarga berdasarkan kecurigaan bahwa mereka membantu Falintil, atau untuk mencari informasi tentang para gerilyawan serta jaringan-jaringan klandestin yang sedang berkembang. Isabel dos Santos Neves bersaksi bahwa ia ditangkap di Maubisse (Ainaro) pada 1979 saat ia berumur 16 tahun, karena saudara laki-lakinya diketahui sebagai anggota Fretilin yang masih tinggal di hutan:

Saya ditangkap bersama kakak laki-laki saya. Saat interogasi kami dipukul dan kedua adik saya yang masih kecil dipaksa untuk mengaku tentang keberadaan Fretilin di hutan. Kakak saya dibawa pergi pada malam hari oleh tentara. Pada pagi harinya seorang Hansip yang menyaksikan pembunuhan kakak saya memberitahu ayah saya bahwa kakak saya sudah dibunuh oleh tentara. Hansip tersebut hanya mengantarkan cincin dan topinya untuk ditunjukkan kepada kami. Mendengar informasi itu ayah saya diam saja, tetapi ayah lalu berkata bahwa itu konsekuensi perang.¹⁶⁵

1980-1988

209. Pada akhir 1981, masih ada anak-anak yang ditahan setelah tertangkap di hutan. Namun demikian, sebagian besar kejadian penahanan anak di bawah umur dalam periode ini terjadi sebagai bagian dari tindakan yang lebih luas terhadap pemberontakan atau karena anak tersebut dicurigai menjalin hubungan dengan Falintil. Bentuk penahanan yang paling umum sepanjang tahun-tahun ini adalah pemindahan seluruh keluarga ke Pulau Ataúro (Dili) untuk memisahkan mereka dari sanak-saudara yang masih berada di hutan. Sementara demonstrasi terbuka mendukung kemerdekaan belum mulai, kelompok-kelompok klandestin menjadi semakin canggih dan tersebar luas. Upaya-upaya Indonesia untuk menguasai mereka juga membawa pada terjadinya penahanan dan kadang kala penyiksaan anggota-anggota muda dari jaringan-jaringan ini.

210. Di awal dasawarsa 1980-an, bermacam taktik kontra-pemberontakan Indonesia terutama berbentuk penumpasan sebagai tanggapan terhadap kegiatan tertentu dari Resistansi dan tindakan untuk menutup sumber dukungan materi, informasi, dan politik bagi para gerilyawan, khususnya jaringan klandestin yang sedang berkembang di kota-kota.

211. Setelah terjadinya serangan Falintil terhadap instalasi penyiaran di Marabia dan markas Yonif 744 di Becora, Dili, pada 10 Juni 1980, setidaknya dua remaja ditahan untuk waktu yang singkat. Luis de Jesus, waktu itu berusia 14 tahun, melaporkan bahwa ia ditangkap pada 10 Juni 1980 dan ditahan sebentar di Koramil Becora sebelum dipindahkan ke penjara Comarca Balide di Dili.¹⁶⁶ Alberto de Deus Maia, waktu itu berusia 11 tahun, menyatakan bahwa Yonif 744 dan Brimob (Brigade Móbil) Polri, menangkapnya pada 11 Juni 1980 dan menahannya di Balibar, di selatan Dili, di mana ia dipaksa mengangkut air.¹⁶⁷

212. Adelino Araújo ditahan dan disiksa bersama banyak orang lain setelah kebangkitan bersenjata (*levantamento*) pada Agustus 1982 di Mau Chiga (Hatubuilico, Ainaro). Penumpasan oleh militer ini mencakup banyak macam pelanggaran hak asasi manusia:

Levantamento 20 Agustus 1982, di Mau Chiga [Hatu-Builico, Ainaro], saya masih berumur 14 tahun. Dari pemimpin pergerakan atau revolta [pemberontakan], menghidupkan kembali kegiatan Fretilin. Pada pemberontakan tersebut banyak penduduk yang mati terbunuh oleh tentara. Maka pada waktu itu saya sebagai anak ditawan oleh tentara [di Koramil Hatu-Builico]. Saya diikat dan dipukul sampai tidak berdaya lagi, saya dibakar dengan puntung rokok, saya hanya bertahan dan menangis dan saya saksikan bagaimana tentara memerkosa wanita-wanita yang ada di daerah itu [di lapangan kantor desa Mau Chiga].¹⁶⁸

213. Kadang-kadang tantangan terhadap kekuasaan Indonesia pada periode ini berakibat pada penghukuman kolektif seluruh komunitas, termasuk penahanan dan

penyiksaan anak-anak. Penduduk Porlamano, Mehara (Tutuala, Lautém) melaporkan bahwa pada 1983, setelah Hansip dan para pemuda lari ke hutan, sejumlah anggota Yonif 641 menahan dan menyiksa para istri, anak-anak, dan kerabat perempuan mereka di pos militer. Satu *aldeia* lain di desa yang sama melaporkan bahwa di tahun yang sama, prajurit-prajurit tentara dari Yonif 745, 321, 641 dan Batalion Linud 100 memaksa anak-anak berusia 15 tahun ke atas untuk berkumpul di satu lapangan terbuka, di mana mereka disiksa dan dibenamkan ke air.¹⁶⁹

214. Kegiatan klandestin dalam dasawarsa 1980-an banyak didasarkan atas ikatan keluarga, dan pihak berwenang Indonesia menggunakan penangkapan dan penahanan untuk memutuskan jalur dukungan ini. Francisco Soares mengungkapkan bahwa pada 1982 ketika berusia 14 tahun, ia dicurigai telah membawa makanan untuk ayahnya yang berada di hutan. Ia ditangkap oleh seorang anggota Hansip bernama C13 atas perintah Komandan Koramil Rifai (orang Indonesia), C108 (anggota badan legislatif Indonesia), dan C15, seorang komandan Hansip. Ia dibawa ke Koramil di Iliomar untuk diinterogasi. Setelah satu minggu ia dilepaskan, dengan syarat wajib lapor selama satu tahun. Keluarga ini kemudian dipindahkan ke Ataúro selama satu tahun karena ayahnya menolak menyerah.¹⁷⁰

215. Dalam upaya untuk memisahkan pasukan Falintil dari anggota keluarga yang dianggap mendukung mereka, ribuan orang dikirim ke Pulau Ataúro pada awal 1980-an.* Lonjakan dalam grafik mengenai penahanan anak-anak di atas ada kaitannya dengan kebijakan ini.

216. Sebagian anak yang dikirimkan ke Pulau Ataúro dipisahkan dari orangtua mereka atau memang sudah menjadi yatim piatu (lihat boks di bawah, setelah paragraf 218), walaupun sebagian besar pergi bersama keluarga mereka:

*Saya Rosalina José da Costa, dibawa bersama dengan orangtua saya ke Ataúro, karena ketika kami masih berada di Viqueque selalu membawa makanan ke Fretilin di hutan. Sehingga diketahui oleh tentara, maka saya bersama keluarga dipindahkan ke Ataúro sebagai orang tahanan. Waktu itu saya baru berumur 10 tahun. Kami diantar dengan mobil TNI ke Laga [Baucau] dan ikut kapal tentara, nomor 509. Bukan kami sendiri saja tetapi kami bersama dengan keluarga lain dan anak-anak mereka. Ketika kami berada di Ataúro sebagai orang tahanan, kami sangat susah dapat makanan dan banyak orang sakit sampai meninggal dunia, terlebih anak-anak. Setiap hari satu sampai tujuh orang anak yang meninggal dunia.*¹⁷¹

* Petunjuk teknis Korem tahun 1982 menyebutkan bahwa orang-orang yang termasuk dalam jaringan pendukung Falintil harus dipindahkan ke Ataúro: "Dengan cara ini, kita bisa memutus hubungan antara jaringan pendukung di pemukiman dan jaringan pendukung di Nurep." ABRI, "Petunjuk Teknis tentang Kegiatan Babinsa," Juknis 06/IV/1982 (Korem 164, Wira Dharma, Seksi Intelijen, William da Costa [Kepala Seksi Intelijen]), terjemahan bahasa Inggris ada dalam Budiardjo dan Liong, *The War in East Timor*, Zed Books, London, halaman 181.

217. Sebagian lainnya kehilangan orangtua mereka di pulau itu, termasuk Mário Correia, yang mengatakan kepada Komisi bahwa ketika ia berumur 12 tahun, orangtuanya meninggal dunia karena kelaparan; diperlukan waktu dua setengah tahun lagi sampai anggota-anggota lainnya dari keluarga itu diperbolehkan pulang.¹⁷²

218. Orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kegiatan klandestin juga dikirimkan ke Ataúro dan sebagian di antara orang-orang ini adalah remaja. Armando de Jesus Barreto melaporkan bahwa Kopassandha menangkap dirinya di Dili Barat pada 10 Juni 1980 ketika usianya 17 tahun. Ia ditahan di Penjara Comarca Balide, disiksa di Korem, dan kemudian dikirimkan ke Ataúro dan tinggal di sana selama empat tahun.¹⁷³

Seorang anak di Ataúro

Joana Pereira ditahan di Ataúro sejak 1 September 1981 sampai November 1982. Pada 1978, orangtuanya meninggal di hutan, Joana bersama adik laki-lakinya, Mateus Pereira, menyerah kepada militer Indonesia. Mereka tinggal bersama kakak-kakak kandung mereka di Lacolio (Quelicai, Baucau). Sementara itu, kakak lelaki mereka, Pascoal Pereira, adalah seorang anggota Falintil di hutan, dengan nama perjuangan Nixon.

Menurut Joana, pada 29 August 1981, saat dirinya berumur 13 tahun, Koramil Quelicai (Baucau) mengumumkan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang punya anggota keluarga di hutan akan dihukum. Di depan kantor desa dipasang selebar papan yang bertuliskan nama-nama orang yang akan dihukum di Ataúro. Nama Joana dan Mateus ada dalam daftar tersebut. Mateus baru berumur sembilan tahun pada waktu itu.

Pada 30 Agustus 1981, Koramil Quelicai mengangkat para tahanan dalam empat truk menuju pelabuhan Laga (Baucau). Keesokan harinya, sekitar pukul 07.00, semua tahanan yang telah dikumpulkan dari Seiçal, Buibau, Quelicai dan Laga, diangkut dengan kapal perang 502 ke Dili. Kapal itu tiba di Dili sekitar pukul 19.00. Pada 1 September 1981 pukul 08.00, para tahanan diberangkatkan ke Ataúro dengan kapal perang 511.

Mereka tiba di Ataúro pada tengah hari. Mereka bertemu dengan para tahanan yang telah terlebih dahulu berada di pulau itu, yang membongkar muatan kapal. Setelah nama mereka diperiksa satu per satu, para tahanan yang baru tiba dibawa ke tempat penghukuman masing-masing. Joana ditempatkan di rumah No. 22 bersama dengan 60 orang, sementara Mateus ditempatkan di rumah No. 24 bersama 70 tahanan lainnya.

Para tahanan tidak mendapat makanan saat kedatangan mereka di Atauro. Joana dan Mateus hanya punya makanan yang mereka bawa dari Quelicai. Setelah satu bulan, masing-masing keluarga mendapat tiga kaleng jagung dari ABRI, dua kali setiap satu bulan. Karena lapar, sebagian orang mencuri pepaya dan ketela pohon dari ladang-ladang penduduk setempat. Namun banyak orang mati, terutama anak-anak dan orang-orang yang sudah tua. Joana ingat bahwa yang mati terutama adalah tahanan yang berasal dari Lospalos dan Viqueque. Setiap hari, dua sampai lima orang mati.

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) diizinkan mengunjungi Atauro pada 1982 dan memberikan bantuan bahan makanan seperti beras, kacang hijau, kacang kedelai, ikan asin, gula, garam, dan ikan kalengan. Bantuan ICRC ini memungkinkan para tahanan untuk bertahan hidup dan tidak ada lagi yang mati sesudahnya.

Pada Oktober 1982, saudara laki-laki Eduardo Freitas mengunjungi Atauro. Setelah kembali ke Dili, ia melapor kepada Kodim. Pada November 1982, Joana dibawa kembali ke Dili dengan kapal. Ia tinggal bersama pamannya, Paulo, di Fomento (Comoro, Dili) dan harus melapor kepada kepolisian setiap hari. Mateus telah dibawa ke Dili terlebih dahulu dan tinggal di Panti Asuhan Motael.¹⁷⁴

219. Tujuan penangkapan sebagian anak ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang kerabat mereka. Aida Maria dos Anjos berusia 14 tahun pada 1983 ketika ia diinterogasi di Viqueque tentang keberadaan saudara laki-lakinya, Virgilio dos Anjos (Ular), salah seorang organisator *levantamento* Kraras:

Dalam interogasi Nanggala memaksa saya untuk memberi informasi tentang keberadaan Komandan Ular. Interogasi selalu dilakukan oleh lima orang anggota Nanggala. Waktu itu C16 yang menjabat sebagai camat Viqueque sedang C17 sebagai Sekwilda [Sekretaris Wilayah Daerah] Viqueque. Mereka aktif menghadiri setiap interogasi saya.¹⁷⁵

220. Seiring dengan berkembangnya jaringan klandestin, anak-anak ditahan dan kadang-kadang disiksa sebagai konsekuensi dari kegiatan mereka sendiri, bukannya karena hubungan keluarga mereka. Pada 1982, seorang anak berumur 14 tahun ditahan dan kemudian disiksa di Ainaro karena dicurigai telah menjalin kontak dengan Falintil:

Pada 1982, saya, Pedro dos Santos, sebagai seorang pemuda yang menjalankan klandestin bersama dengan Falintil. Oleh karena itu, pada suatu hari (saya lupa tanggalnya) seorang intel, C18 datang ke rumah dan membawa saya ke kampung Tatiri [Hato Builico, Ainaro]. Sampai di sana, C18 mengikat kaki dan tangan saya dengan kabel plastik, saya digantung pada atap rumah, lalu dipukul dengan tongkat selama dua jam menyebabkan seluruh badan saya bengkak.

*Pada pagi harinya, C18 membawa saya ke Dare, Mau Chiga [Hato Bulico, Ainaro]. Di sana saya ditahan selama dua hari. Kemudian, C18 membawa saya untuk ditahan di Kasi Satu, Ainaro. Sesampainya di Ainaro, Kasi Satu C19 meminta informasi. Karena saya tidak menjawab yang sebenarnya, maka saya ditampar dua kali di bagian muka, kemudian saya disetrum dengan listrik di bagian ibu jari dan telinga selama setengah jam. Hingga menyebabkan indera pendengaran saya mengalami gangguan...Setelah itu saya ditahan bersama banyak orang yang saya tidak kenal, selama empat bulan.**

221. Pada Agustus 1983, sebagai bagian dari penumpasan sesudah pemberontakan Kraras, sejumlah gadis muda termasuk di antara orang-orang yang ditahan di Viqueque. Adalgisa Ximenes, yang pada waktu itu berusia 14 tahun dan aktif dalam suatu jaringan bawahan, ditahan selama enam bulan dan diinterogasi oleh Komandan Kodim, Mayor C20. Ia dan teman-temannya ditangkap pada 7 Agustus 1983 tanpa sepengetahuan orangtua mereka, berdasarkan kecurigaan bekerja untuk Fretilin di hutan. Ia diinterogasi oleh militer, kadang-kadang sampai pagi hari, dan diancam akan dibunuh kalau tidak mengatakan yang sebenarnya.¹⁷⁶

222. Anak-anak juga ditahan karena pelanggaran terhadap kontrol ketat kehidupan sipil pada waktu itu. Maria Amaral dari Tutuloro (Same, Manufahi) melaporkan bahwa pada 1983, ketika berumur 15 tahun, ia termasuk di antara sekelompok orang yang ditahan dan disiksa oleh ABRI di Kodim Manufahi selama satu minggu. Mereka ditangkap karena telah pergi bekerja di kebun keluarga tanpa surat jalan dan oleh karena itu dicurigai membantu Falintil.¹⁷⁷

223. Sejak akhir 1983, pihak berwenang Indonesia mulai mendakwa dan mengajukan ke pengadilan beberapa tahanan politik. Akan tetapi, mekanisme ini agaknya tidak diterapkan secara luas pada anak-anak yang ditahan; dari 267 sidang pengadilan politik yang diidentifikasi melalui arsip pengadilan dari masa empat tahun pertama proses peradilan (1983-1987) yang juga merupakan masa tersibuk, hanya dua terdakwa yang di bawah umur.[†] Keduanya dinyatakan bersalah telah melakukan makar.[‡]

* Pernyataan HRVD 07180. Dalam kasus serupa lima tahun sebelumnya, Luis de Jesus seorang anak berusia 11 tahun yang dicurigai telah menyediakan pasokan untuk Fretilin termasuk dalam sejumlah 11 orang yang ditahan dan disiksa oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Sang Tai Hoo (satu bekas toko milik orang Cina yang oleh tentara Indonesia digunakan sebagai tempat penyiksaan) pada Agustus 1977. Ia kemudian dikirimkan ke sel tanpa penerangan di Penjara Comarca Balide (Dili) dan selanjutnya ditahan dalam sel biasa selama enam bulan (Pernyataan HRVD 05679).

† Ada kemungkinan bahwa angkanya kecil karena sejak tahun 1983 pengadilan untuk orang di bawah umur dilaksanakan secara berbeda dengan orang dewasa. Ini mencakup ketentuan bahwa sidang dilakukan secara tertutup. Arsip kasus-kasus ini, seperti banyak arsip pengadilan yang lain, mungkin telah hilang. Lihat: *Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.06-UM>01 Tahun 1983 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang* untuk keterangan lebih lanjut tentang prosedur persidangan.

‡ Akan tetapi, menurut satu pernyataan, mekanisme hukum akhirnya digunakan dalam kasus anggota di bawah umur satu kelompok bawah tanah. Pada tanggal 2 Februari 1986 di Baucau, dua orang anak berusia 15 tahun anggota satu kelompok bawah tanah ditangkap setelah satu orang anggota tersem-

224. Penahanan dan penyiksaan juga digunakan pihak berwenang Indonesia untuk merekrut informan dan paramiliter. Lucas da Silva melaporkan bahwa pada 1986, ketika berusia 17 tahun, ia termasuk di antara satu kelompok yang terdiri atas empat orang yang ditangkap oleh dua orang anggota pasukan khusus, satu di antaranya bernama C21 berpangkat sersan kepala. Mereka ditahan dan disiksa di rumah ketua rukun tetangga di Venilale (Baucau). Keempat orang itu dibawa ke Uatuhaco (Venilale, Baucau) di mana mereka ditanyai sambil dicekik dengan rantai dan disetrum. Akhirnya, mereka terpaksa menjadi informan dan setelah tiga tahun, mereka direkrut ke dalam Tim Sera, satu kelompok milisi awal.¹⁷⁸ Yang lebih terkenal, Eurico Guterres adalah seorang pelajar sekolah menengah berusia 19 tahun pada 1988 ketika ditangkap karena menjadi anggota satu kelompok klandestin setengah-keagamaan, Santo António. Ia dijatuhi hukuman empat bulan penjara karena menjadi anggota kelompok ilegal. Dalam dasawarsa 1990-an ia bergabung dengan Gadapaksi (Garda Muda Penegak Integrasi). Ia menjadi terkenal pada 1999 sebagai komandan kelompok milisi bermarkas di Dili, Aitarak, dan wakil panglima organisasi gabungan milisi, Pasukan Pejuang Integrasi (PPI).

1989-1998

225. Dengan pembukaan terbatas Timor-Leste bagi orang luar pada 1989, gerakan kemerdekaan mulai menggunakan demonstrasi terbuka menentang pendudukan sebagai salah satu bentuk perlawanan. Metode ini sangat bertumpu pada keterlibatan pelajar. Demonstrasi-demonstrasi ini biasanya disusun, dalam beberapa kasus didahului, dengan penangkapan orang-orang yang dicurigai sebagai organisator.

226. Pada Oktober 1990, organisasi-organisasi internasional hak asasi melaporkan lebih daripada 100 penangkapan. Banyak dari orang yang ditangkap adalah pelajar sekolah menengah yang ditahan untuk waktu yang singkat dan disiksa. Metode penyiksaan yang digunakan meliputi penyetruman, menyundut dengan rokok menyala, dan pemukulan yang parah. Penangkapan terjadi menyusul penyerangan terhadap seorang tentara Indonesia oleh pemuda Timor-Leste, pencemoohan terhadap seorang pejabat Indonesia di satu sekolah menengah pertama, dan munculnya tulisan anti-Indonesia di dinding-dinding sekolah Externato.¹⁷⁹ Belchior Francisco Bento Alves Pereira menyampaikan kepada Komisi bagaimana ia ditahan dan disiksa di sebuah rumah SGI di Colmera (Dili) pada 1990 karena terlibat dalam kasus Sekolah St. Paulus (lihat paragraf 150, pada bagian 7.8.2.3 Anak-anak dalam gerakan klandestin, di atas). Ia menjalani waktu empat tahun di Penjara Comarca Balide, Dili, sebelum dilepaskan pada 1995.

bak secara tidak sengaja oleh Falintil dan kemudian ditangkap oleh ABRI. Mereka awalnya ditahan di Pos Kopassus di Baucau, di mana mereka disetrum di tangan, telinga dan hidung mereka, ditelanjangi dan dipukuli selama satu minggu. Mereka kemudian dibawa ke Penjara Comarca Balide di Dili, di mana mereka ditahan selama satu bulan. Selanjutnya mereka dibawa ke Kantor Urusan Sosial dan Politik (Sospol), di mana mereka diinterogasi selama satu hari. Kemudian mereka diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara satu tahun. (Pernyataan HRVD 04199.)

227. Para pelajar secara khusus dijadikan sasaran dalam penumpasan setelah terjadinya Pembantaian Santa Cruz. Mateus dos Santos terlibat dalam kegiatan klandestin pada waktu itu dan diberi informasi oleh jaringan setiap kali akan ada demonstrasi. Ia ingat bahwa militer Indonesia mengarah langsung ke sejumlah sekolah menengah atas setelah pembantaian itu untuk mengidentifikasi para demonstan:

Ketika dengar tembakan, kami balik ke sekolah, tapi ABRI sudah keprungu sekolah kami, pakai mobil Hino di depan pintu semua. Pada saat itu mereka pakai seragam. Ada pasukan BTT dari Jawa punya, pengganti dari [Yonif] 508. Nomor tidak ingat. Kami dikeprungu, sekolah ditutup. Mereka sudah tahu, tahu persis. Mereka takut amukan massal, terus mereka cek absen-absen siswa sekolah. Itu perintah kepada guru-guru. Saya dengar langsung dari guru. Setelah dari sekolah, intel Kopassus dengan intel polisi disuruh mengintai kami, siapa yang tidak masuk pada 12 November 1991.†*

228. Menyadari ancaman yang bisa timbul dari aksi-aksi ini, pihak berwenang Indonesia melakukan berbagai penahanan pencegahan yang berhubungan dengan kunjungan orang asing atau kecurigaan akan adanya demonstrasi (lihat boks di bawah, kesaksian Naldo Gil Da Costa, paragraf 229). João Baptista Monis melaporkan bahwa pada Maret 1992, ketika berusia 15 tahun, ia ditahan di Dili bersama seorang temannya. Keduanya telah berpartisipasi dalam demonstrasi Santa Cruz. Para agen intelijen membawa mereka awalnya ke kantor desa Caicoli, kemudian ke Kodim Dili, dan akhirnya ke Taibesi di mana banyak tahanan lain sedang dipukuli dan ditendangi para prajurit tentara.¹⁸⁰

229. Naldo Gil Da Costa menyampaikan kepada Komisi pada Audiensi Publik Nasional mengenai Anak dan Konflik, mengenai penangkapan dan penyiksaannya ketika berusia 16 tahun sebelum berlangsungnya satu demonstrasi yang telah direncanakan:

Kesaksian Naldo Gil da Costa

Pada 28 Agustus 1992 kami menerima sepucuk surat dan sebuah kaset dari Xanana meminta agar kami menyelenggarakan demonstrasi memprotes kejadian Santa Cruz, pada saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok di Jakarta, yang akan berlangsung dari 3 sampai 6 September. Setelah menelusuri berbagai kemungkinan di bawah pengawasan ketat SGI, akhirnya kami menulis surat kepada Xanana mengatakan bahwa tidak mungkin mengadakan demonstrasi.

* Menurut penelitian CAVR kemungkinan batalion itu adalah Batalion Infanteri 516.

† Wawancara CAVR dengan Mateus dos Santos, Dili, 31 Oktober 2003; lihat juga Pernyataan HRVD 02726 tentang seorang anak laki-laki berusia 16 yang ditahan selama tiga bulan setelah peristiwa Santa Cruz.

Akibatnya terjadi pertengkaran di antara pemuda. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa kita harus tetap mengadakan demonstrasi karena ini perintah Komandan Xanana. Akhirnya demonstrasi tetap dilaksanakan oleh kurang lebih 20 orang.

Tetapi pada akhirnya semua 20 orang dari kami itu ditangkap oleh SGI. Saya dicari-cari dan ditangkap. Mereka memborgol saya, menutup mata saya dengan kain dan terus-menerus memukuli saya. Mereka memasukkan sepucuk pistol ke dalam mulut saya dan menyiksa saya sampai saya hampir jatuh. Mereka kemudian melemparkan saya ke dalam mobil dan dibawa ke SGI Farol. Di Farol, tangan saya masih diborgol dan kain tetap diikat pada mata saya kemudian kaki saya diikatkan ke sebuah kursi dan seorang perwira SGI memukuli saya dengan sebatang besi. Saat itu sekujur tubuh saya dialiri listrik. C108 dan 10 anak buahnya menginterogasi saya. Karena tetap diam akhirnya C108 marah dan mulai memaki saya berkali-kali dengan kata-kata “Anak-pelacur, kamu asal dari mana?” Sejak itu saya dipukul terus-menerus. Tulang-tulang kami patah dan darah mengucur dari luka-luka kami.

Pada 6 September saya dibawa oleh dua tentara dan empat orang sipil ke gedung sekolah dasar di Tacitolu. Setelah menelanjangi saya, mereka mengikat saya di bagian belakang sebuah mobil lalu diseret sejauh kira-kira 200 meter. Kemudian saya dibawa ke Fatuk, Dili, tempat di mana biasanya orang-orang dibunuh. Mereka memaksa saya menggali kuburan saya sendiri, menyuruh saya masuk ke dalamnya dan berdoa karena saya akan dibunuh. Ketika mereka hendak menembak kepala saya, salah seorang tentara berkata, “Kalau kita bunuh anak ini kita tidak akan masuk surga. Anak ini tidak bersalah. Kita harus membiarkan dia hidup.” Mereka menarik saya keluar dengan sebuah linggis dan cangkul, kemudian menyiksa saya sepanjang perjalanan dari Tacitolu ke SGI Colmera.

Selama seminggu ditahan di SGI, saya dipukuli dan diinterogasi. Kemudian bersama beberapa teman lain, kami dipindahkan ke Penjara Balide, di mana kami diborgol kemudian ditendangi dan dipukuli oleh 50 tentara. Setelah itu borgol kami dilepas dan kami dimasukkan ke sel. Toilet di dalam sel itu penuh dan meluap sehingga kotoran manusia dan air kencing membanjiri dan menutupi lantai. Kami semua telanjang. Saya dan teman saya Marcos menertawakan diri sendiri karena kami menduduki tahi yang menutupi lantai. Pada 16 September 1992 tentara dari Batalion 745 di Lospalos mengambil Marcos dari sel dan setelah itu ia tidak pernah kelihatan lagi.

230. Alexandrino da Costa mengungkapkan kepada Komisi tentang penangkapan dan penahanan dirinya setelah suatu demonstrasi pada 1995:

Pada 9 Januari 1995 mahasiswa UNTIM [Universitas Timor Timur] mengadakan demonstrasi dan saya terlibat di dalamnya. Saya ditangkap kembali oleh tentara dan polisi. Mereka katakan bahwa saya tidak takut mati, masih mau mengikuti demonstrasi. Seorang dari mereka memukul dan menendang sambil menyeret saya dan membuang ke dalam mobil Hino. Saya dibawa ke Polwil [Kepolisian Wilayah] di Comoro, Dili untuk diinterogasi. Di Polwil saya diinterogasi, dipukul, ditendang, dan disetrum dengan listrik. Seluruh tubuh disetrum termasuk alat kelamin. Pakaian saya dilepas semua. Kami yang ditangkap ketika itu berjumlah 20 orang. Kami ditahan di Polwil hampir satu tahun. Setelah itu sekitar tahun 1995 kami dipindahkan ke LP [Lembaga Pemasyarakatan] Becora, Dili. Kami diadili dan dijatuhi hukuman penjara di penjara Becora kurang lebih dua tahun delapan bulan.¹⁸¹

231. Demonstrasi dan penangkapan terus berlanjut sepanjang dasawarsa 1990-an. Pada 15 November 1995, sekelompok pelajar sekolah menengah atas berjalan kaki untuk bergabung dalam satu demonstrasi di kampus Universitas Timor Timur. Mereka dikepung dua truk polisi anti-huru-hara di dekat Hotel Mahkota, Dili. Banyak yang berhasil melarikan diri, tetapi sekitar 30 orang dilaporkan dipukuli dan dibawa ke markas kepolisian sebelum dilepaskan.¹⁸²

232. Anak-anak juga ditahan di sepanjang dasawarsa 1990-an karena dicurigai melakukan kontak dengan Falintil. Zeca Soares melaporkan kepada Komisi bahwa ketika dirinya menjadi seorang *estafeta* berumur 16 tahun pada 1994, ia dibawa oleh sekretaris desa ke pos SGI di Letefoho (Ermera). Di sana ia ditahan di dalam satu sel gelap dan dipukuli oleh tiga orang sipil atas perintah SGI. Ia dilepaskan setelah dua bulan, tetapi beberapa bulan kemudian ia ditangkap kembali oleh anggota-anggota SGI di daerah Asulau (Ermera) dan dibawa ke Tata Hatolia (Ermera). Di jalan, ia dimasukkan ke dalam sebuah karung dan dilemparkan ke satu jurang. Masih hidup, ia kemudian dibawa ke pasukan Rajawali Yonif 713 (Kostrad) di Suai dan ditahan selama satu minggu di mana ia dipukuli berkali-kali.¹⁸³

1999

233. Pada 1999 ada gelombang baru penahanan oleh militer dan milisi-milisi pembantunya (lihat Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan). Anak-anak termasuk di antara mereka yang ditahan. Misalnya, pada April 1999, komandan SGI di Marco (Cailaco, Bobonaro), bernama C22, memerintahkan kepada TNI dan milisi Halilintar untuk bekerja bersama mengidentifikasi orang-orang yang telah membunuh tokoh pro-otonomi setempat, Manuel Gama. Para prajurit tentara dan anggota milisi melakukan penyisiran di desa-desa sekitar dan menahan 30 penduduk, termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka dipaksa berjalan kaki ke Koramil Cailaco di Marco, di mana mereka ditahan sampai empat hari.¹⁸⁴

234. Penahanan kadang-kadang diikuti dengan perekrutan paksa. Misalnya Komisi menerima kesaksian yang menguraikan proses perekrutan paksa pemuda untuk menjadi milisi Laksaur di Covalima.¹⁸⁵

235. Juga Florentino Nunes mengatakan kepada Komisi bahwa pada 8 April 1999, saat ia berusia 17 tahun, ia dicurigai sebagai simpatisan CNRT. Ia dipukuli oleh anggota-anggota milisi BMP di Leopa (Liquiçá, Liquiçá) dan ditahan di rumah Bupati Liquiçá selama beberapa hari. Kemudian ia ditahan di benteng di Maubara (Liquiçá) selama dua bulan lagi.¹⁸⁶

236. Seorang remaja lain, yang berusia 17 tahun, termasuk dalam kelompok empat orang pelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Beco (Suai, Covalima) yang ditahan oleh seorang anggota Mahidi bernama C23, seorang anggota tentara bernama C22 dan beberapa orang lainnya. Mereka dibawa ke markas Mahidi di Zumalai (Covalima) dan ditahan semalaman untuk ditanyai. Keesokan harinya, mereka dikembalikan ke rumah masing-masing, yang digeledah untuk mencari bukti keterlibatan dan senjata Fretilin, dan di sana mereka dipukuli serta disundut dengan rokok. Kemudian mereka dibawa ke rumah komandan Mahidi setempat, C24, dan ditahan selama tiga hari lagi untuk ditanyai. Sepanjang waktu itu mereka tidak diberi makan ataupun minum.¹⁸⁷

Penahanan oleh UDT

237. Komisi telah menemukan bahwa UDT melakukan sejumlah penangkapan pada Agustus 1975 (lihat Bab 7.4: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan). Komisi menerima dua pernyataan yang menguraikan kasus penahanan remaja pendukung Fretilin yang dilakukan oleh UDT, masing-masing sekitar satu minggu, di masa “kudeta” Agustus 1975. Bernardino da Costa melaporkan bahwa ia berumur sembilan tahun pada waktu ditangkap oleh seorang anggota UDT bernama C25 di Atudara (Cailaco, Bobonaro).¹⁸⁸ João do Carmo de Araújo mengisahkan bahwa ia ditangkap oleh UDT di Ataúro Vila (Ataúro, Dili) bersama dengan tiga orang lain, termasuk satu orang anak berumur 15 tahun bernama Agostinho.¹⁸⁹ Luis de Jesus Guterres mengungkapkan bahwa seorang anak berumur satu tahun bernama Filomeno de Jesus Pereira adalah salah satu dari sekelompok orang yang ditahan oleh UDT pada 11 Agustus 1975 di Ailoklaran (Dili).¹⁹⁰ Juga ada satu laporan dari Domingos do Santos yang menyatakan bahwa tiga prajurit tentara Portugis menahannya di Dili pada Agustus 1975, ketika berusia 16 tahun. Pemuda ini dibawa ke kantor UDT di Palapaço, di mana ia ditahan selama tiga hari sebelum berhasil melarikan diri.*

* Lihat juga Pernyataan HRVD 04677 yang menyebutkan: “Pada Juli 1975, saya ditangkap oleh tiga orang tentara Portugis yang saya tidak kenal identitasnya di depan lapangan terbang helikopter Dili di mana waktu itu saya sedang menunggu mobil untuk ke Liquiçá. Setelah menangkap saya, mereka (tentara Portugis) langsung memukul saya sampai saya jatuh pingsan selama lima menit. Kemudian saya sadar kembali. Mereka langsung mengikat tangan saya dan membawa saya ke kantor UDT di Palapaço, Dili. Sampai di Palapaço, mereka menyerahkan saya pada Bapak Manuel Carrascalão. Kemudian beliau menyuruh anak buahnya melepaskan tali yang diikat pada tangan saya, lalu memasukkan saya ke dalam ruang atau sel tahanan selama tiga hari, tiga malam dan tidak diberi makan dan minum. Kemudian saya melarikan diri dari tahanan di kantor UDT pada waktu situasi di kota Dili dalam keadaan kacau.”

Penahanan oleh Fretilin

238. Pada 1975-1976, Fretilin biasa menahan anak-anak bersama kerabat mereka yang dewasa atas alasan yang terkait dengan konflik antarpantai. Selanjutnya, anak-anak ditahan karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan, dicurigai menjadi “pengkhianat”, atau sebagai akibat dari konflik-konflik di dalam partai.

239. Anak-anak ditahan bersama orangtua mereka oleh Fretilin pada masa konflik antarpantai. Seorang pendukung UDT, João da Costa, menyampaikan kepada Komisi bagaimana ia ditahan dan disiksa selama lima bulan yang dimulai pada September 1975. Dia ditahan bersama anak perempuannya, Saturnina yang baru berumur tiga bulan, temannya, João Castro, dan anak João Castro yang baru berumur enam bulan. João da Costa dan istri serta bayinya telah melarikan diri ke Venilale (Baucau) pada saat terjadi “kontra-kudeta” oleh Fretilin, namun tertangkap di sana bersama para pendukung UDT lainnya. João da Costa dan João Castro dipukuli, sedangkan Saturnina dan bayi João Castro ditikam dengan pisau. Kemudian Fretilin membawa keluarga-keluarga itu ke Viqueque, di mana mereka terus disiksa.¹⁹¹

240. Sejumlah anak yang lebih tua ditahan selama berlangsungnya konflik ini tanpa keluarga mereka, karena afiliasi politik mereka atau afiliasi politik keluarga mereka. Misalnya, Antero Soares bersaksi bahwa ia ditahan Fretilin pada 1974 ketika berusia 16 tahun di Mindelo (Turiscai, Manufahi), karena ayahnya adalah pendukung Perkumpulan Kerakyatan Demokratis Timor (Associação Popular Democrática Timorense, Apodeti).¹⁹²

241. Hubungan keluarga terus berperan penting dalam persaingan di dalam dan antarpantai, dan ada beberapa keterangan tentang anak-anak yang ditahan oleh Fretilin bersama keluarga luas mereka. Constantinho Ornai mengungkapkan kepada Komisi tentang penahanannya pada 1976, saat berusia 11 tahun, karena konflik di dalam Fretilin:

Pada Oktober, Comite Região [Komite Region] mau menangkap kami di Uatu-Carbau [Viqueque]. Pada suatu pagi subuh kami ditangkap dan dibawa ke Iliomar [Lautém]. Di Iliomar kami diikat dan dibawa ke Salari [Ilomar, Lautém]. Di sana kami dimasukkan ke dalam kandang babi dalam keadaan terikat. Kami diinterogasi secara berurutan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, termasuk saya. Kami diikat selama beberapa hari. Kami hanya dapat makanan satu kali sehari. Kami diikat dengan tali pohon enau dan tali pohon sagu. Kedua tangan kami diikat ke belakang dengan ikatan tiga, pertama ikat di telapak tangan, kedua di siku, dan ketiga di lengan tangan, kemudian digantung pada pohon. Sedang kaki kami dipasung dengan satu batang bambu dan satu batang pohon pinang.

Kemudian C27, komandan operasional, membawa saya dalam keadaan dijaga dengan sebuah senjata G-3 untuk diinterogasi. Lalu Komandan C28 dan C29 menginterogasi saya. Setelah diinterogasi saya menjadi tahanan bebas luar untuk bertugas di dapur umum.

Dengan tugas itu, saya menimba air dan mengambil kayu bakar. Selang satu malam saya menjadi tahanan dapur umum. Paman saya bersama beberapa orang lainnya dibunuh oleh kubu Fretilin yang dipimpin oleh Komandan C28 dan C29, sekitar 16 November 1976.¹⁹³

242. Keluarga-keluarga terancam dicurigai berencana menyerah atau menghubungi musuh jika mereka kedapatan sedang mencari makanan tanpa izin. Isabel Amaral menyatakan kepada Komisi bahwa pada 1976, ketika berusia 17 tahun, ia ditahan sebentar bersama keluarganya oleh Fretilin karena mereka berusaha kembali ke tempat mereka menyembunyikan makanan.¹⁹⁴ Komisi juga telah mendengar dari Luzia de Jesus Barreto, ibu Bastião, bahwa pada 1978 ketika Bastião berumur 14 tahun ia pergi mencari makanan di Remexio (Aileu) dan ditahan karena dicurigai menjadi pengkhianat. Ia kemudian meninggal di dalam satu Kamp Rehabilitasi Nasional (Campo de Reabilitação Nacional, Renal) Fretilin karena penyakit.¹⁹⁵

243. Ada juga beberapa kasus, seperti disebutkan dalam bagian tentang Anak-anak dalam Falintil di atas, mengenai gerilyawan di bawah umur yang ditahan karena pelanggaran disiplin. Ijais da Costa menyatakan bahwa ketika berumur 17 tahun, pada 1976, di Berelau (Liquidoe, Aileu), ia ditahan selama dua hari untuk perbuatan tidak sengaja melepaskan tembakan.¹⁹⁶ Masa penahanan untuk tindakan pelanggaran disiplin bisa mencapai satu tahun atau lebih, misalnya pelanggaran disiplin yang memungkinkan seorang tahanan melarikan diri. Jaime da Costa mengisahkan kepada Komisi bagaimana pada Juni 1977, ketika berusia 14 tahun, sebagai seorang anggota Falintil ia memungkinkan seorang tahanan melarikan diri karena tertidur saat bertugas jaga. Jaime ditahan di Lacló (Manatuto) pada 19 Juni 1977 berdasarkan “surat perintah penahanan” yang dikeluarkan *comandante da região* (komandan region). Ia ditahan selama satu tahun tiga bulan, yang dilaluinya sebagian dalam sebuah lubang, dan diharuskan bekerja di ladang.¹⁹⁷

244. Anak-anak ditahan Fretilin dengan keadaan yang berbeda-beda. Constantinho Ornai menjalani sebagian waktu sebagai seorang tahanan sebelum diberi status “tahanan bebas” dan diharuskan bekerja.¹⁹⁸ Kadang-kadang anak-anak ditahan dalam waktu singkat dan kemudian diberi tugas kerja untuk suatu periode yang bisa berlangsung mulai dari hanya beberapa hari sampai bertahun-tahun. Paulino Laserdo da Costa mengisahkan bahwa ketika ia berusia 16 tahun, pada 1976, dia ditahan di Cairui (Laleia, Manatuto). Ia ditahan hanya selama 30 menit sebelum diberi status “tahanan bebas” dan diharuskan bekerja mengumpulkan garam dari laut yang ditukarkannya dengan makanan untuk Falintil.*

245. José dos Santos yang berusia 12 tahun bersama keluarganya mengalami kondisi yang jauh lebih sulit. Ayahnya adalah seorang pendukung UDT, tetapi José tinggal di

* Pernyataan HRVD 05226; dalam satu kasus lainnya di Manatuto, Sebastião da Silva mengatakan bahwa ia berumur 12 tahun pada waktu ditahan dan diharuskan bekerja. Ia ditahan bersama dengan kakaknya di Barique (Manatuto) oleh Fretilin pada tahun 1976 karena mereka mantan pendukung UDT dan Fretilin takut mereka “berkepala dua.” Ia dipaksa mengolah sagu untuk Falintil selama tiga tahun. (Pernyataan HRVD 06513.)

wilayah Fretilin di Manatuto bersama anggota-anggota lain dari keluarga besarnya, yang beberapa di antaranya aktif di Falintil dan Fretilin. Karena dicurigai menjalin kontak dengan ayah mereka dan pembagian kekayaan keluarga, seluruh keluarga ini ditahan pada akhir 1976 atau awal 1977. Selama 18 bulan berikutnya mereka berpindah-pindah di sekitar Manatuto bersama Fretilin sampai akhirnya mereka terkepung dan ditangkap Yonif 315 pada 20 Juli 1978. Pertama, keluarga ini ditahan di Welihumeta (Laclo, Manatuto) selama tiga atau empat bulan. Di sini, José dan anggota-anggota keluarga lainnya ditahan dalam sebuah lubang di tanah, sementara yang lainnya, termasuk dua saudara laki-lakinya yang masing-masing berusia 13 tahun dan dua bulan, ditempatkan dalam sebuah gubuk. Kemudian mereka dibawa ke Hatuconan (Laclo, Manatuto) tempat pimpinan Fretilin setempat bermarkas. Anak-anak di bawah umur 10 tahun ditempatkan di sebuah bangunan kecil yang berfungsi sebagai tempat pengasuhan anak, sementara José, saudara laki-lakinya yang berusia 13 tahun, dan tiga anak lelaki lainnya yang bukan kerabat mereka yang berusia 10-12 tahun tinggal bersama pemimpin Fretilin, mencuci pakaian dan membantu membagikan perbekalan. José pernah satu kali dikirimkan ke satu Renal (kamp “rehabilitasi” Fretilin), di mana dia ditahan dalam sebuah gubuk selama empat hari sebelum dikirimkan kembali ke Hatuconan. Setelah setahun di sana, yang disusul dengan tiga bulan di Manaleta (Laclo, Manatuto), mereka pindah berkali-kali sampai mereka tertangkap.¹⁹⁹

246. Setelah kehancuran “wilayah bebas (*zonas libertadas*) pada awal 1979, Fretilin tidak lagi menguasai cukup wilayah atau penduduk yang memungkinkan mereka melakukan penahanan, dan meskipun masih disebutkan adanya beberapa kasus, namun jumlahnya kecil dan tidak satu pun dari kasus-kasus yang diketahui Komisi melibatkan anak-anak.

Pembunuhan dan penghilangan

Pendahuluan

247. Anak-anak mati sebagai akibat konflik politik di Timor-Leste, mulai dari hari-hari pertama konflik antarpantai pada 1975 sampai hari-hari terakhir kekuasaan Indonesia. Akan tetapi, konteks dalam mana anak-anak tersebut meninggal berbeda-beda sepanjang masa tersebut. Sesudah invasi Indonesia pada 1975, banyak sekali anak-anak yang mati akibat kekurangan makan (lihat Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan), tetapi banyak juga yang mati dalam penyerangan tentara baik yang bersasaran maupun yang sembarangan dan ada juga yang dibunuh secara sendiri-sendiri. Pada dasawarsa 1980-an kasus-kasus yang diidentifikasi Komisi cenderung berupa anak-anak yang dibunuh bersama orang-orang dewasa dalam pembunuhan massal, seperti yang terjadi di Kraras, Bibileo (Viqueque), atau di Gunung Aitana (Laleia, Manatuto). Ada juga kasus-kasus terpisah selama masa ini tentang anak-anak yang dibunuh karena dicurigai terlibat kegiatan prokemerdekaan. Dalam dasawarsa 1990-an, kecenderungan ini berlanjut, terutama dalam hubungannya dengan demonstrasi-demonstrasi terbuka, yang paling terkenal di antaranya adalah pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991. Pada 1999 terjadi gelombang pembunuhan anak-anak, banyak di antaranya

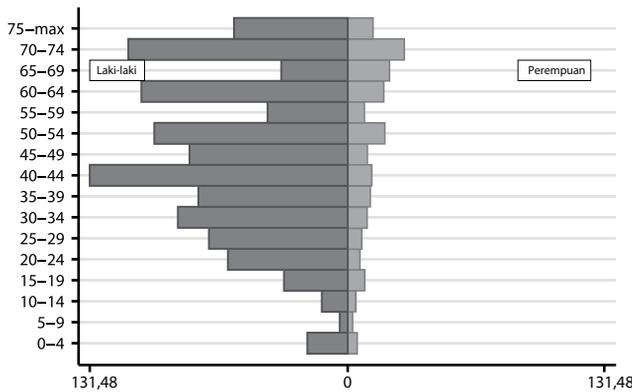
adalah anggota gerakan bawahan atau dari keluarga atau kampung-kampung prokemerdekaan. Pembunuhan-pembunuhan ini sering terjadi sebagai bagian dari penyerangan membabitkan atas kelompok-kelompok yang mencari perlindungan di gereja-gereja atau rumah-rumah pribadi, tetapi ada juga kejadian di mana anak-anak sengaja dibunuh bersama anggota keluarga lainnya atau sebagai pengganti anggota keluarga yang tidak tertangkap. Sementara sebagian besar pembunuhan anak-anak dilakukan oleh ABRI/TNI dan badan-badan paramiliter yang diciptakannya, Fretilin dan Falintil juga bertanggung jawab atas pembunuhan anak-anak.

248. Dalam penelitian yang dilakukannya, Komisi tidak menemukan bahwa anak-anak sebagai kelompok dijadikan sasaran khusus oleh kelompok manapun selama periode mandat Komisi. Meskipun demikian, anak-anak yang meninggal dalam periode ini harus diakui dan dikenang. Karenanya, pembahasan berikut ini merupakan garis besar dari sebab-sebab dan konteks anak-anak dibunuh akibat dari konflik-konflik politik.

Profil pelanggaran

249. Dari 5.120 kasus pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan kepada Komisi, 7,1% (362/5.120) penduduk sipil yang dilaporkan dibunuh adalah anak-anak kecil, meskipun hanya 41,4% (2.120/5.120) kasus yang memasukkan umur korban. Ini menunjukkan bahwa anak-anak bukanlah sasaran pembunuhan, khususnya jika proporsi seluruh penduduk yang di bawah umur diperhitungkan. Akan tetapi, karena keengganan untuk membunuh anak-anak itu lebih kuat dibandingkan dengan membunuh orang dewasa dan kemungkinan bahwa anak-anak pada umumnya tidak begitu banyak di garis depan politik maupun militer (walaupun mereka terlibat dalam keduanya), angka-angka ini menunjukkan bahwa kenyataannya anak-anak yang terbunuh jumlahnya melebihi proporsinya.

Tingkat pembunuhan penduduk sipil (per 10.000 orang), berdasarkan umur dan jenis kelamin, 1974 – 1999

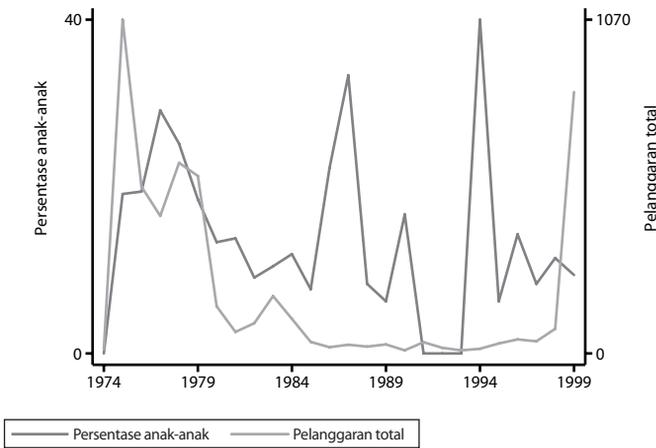


Sumber: (1) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (2) Sensus penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia

Catatan: 59,6% catatan pelanggaran tak memiliki data umur ataupun jenis kelamin korban

250. Gambar di bawah ini menunjukkan pola pembunuhan penduduk sipil anak-anak sepanjang waktu. Kelihatan bahwa bagian terbesar pembunuhan anak-anak terjadi dalam periode ketika keseluruhan pembunuhan relatif tinggi. Lebih jauh, 63,3% (229/362) dari pembunuhan penduduk sipil yang terdokumentasi pelakunya adalah militer Indonesia. Dengan demikian, militer Indonesia agaknya telah melakukan pembunuhan skala besar dengan cara yang menunjukkan bahwa tidak diambil langkah yang memadai untuk mencegah pembunuhan anak-anak.

Pelanggaran (pembunuhan) dalam lintas-waktu, 1974 – 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

251. Jumlah terbesar pembunuhan anak-anak terjadi pada kurun waktu 1975-1979 (terutama 1975 dan 1978) dan pada 1999. Sesudah reda pada 1980, jumlah anak-anak yang terbunuh meningkat sedikit pada 1981-1982 dan pada paruh kedua dasawarsa 1990-an. Polanya sejalan dengan pembunuhan orang dewasa (dengan perkecualian bahwa jumlah anak-anak yang terbunuh turun pada 1983). Mengenai jenis kelamin korban, dilaporkan bahwa 77,6% (281/362) korban pembunuhan anak-anak adalah laki-laki, sementara angka untuk korban perempuan adalah 21,0% (76/362).

252. Militer Indonesia bertanggung jawab untuk 63,3% pembunuhan anak-anak dari seluruh kasus yang dilaporkan, Fretilin/Falintil 27,6% (100/362), milisi yang didukung militer Indonesia 11,9% (43/362), dan UDT 1,9% (7/362).*

253. Di dalam kategori pembunuhan anak-anak sipil di bawah umur, anak-anak yang lebih tua, berumur 15-19 tahun adalah korban utama, hampir dua kali lipat jumlah pembunuhan kelompok umur terbesar kedua, 10-14 dan 0-4 tahun. Jumlah terkecil pembunuhan anak-anak dilaporkan berada dalam kelompok umur 5-9 tahun, yang

* Ketika proporsi pertanggungjawaban kekerasan dihitung, beberapa kekerasan mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pelakunya lebih dari satu orang.

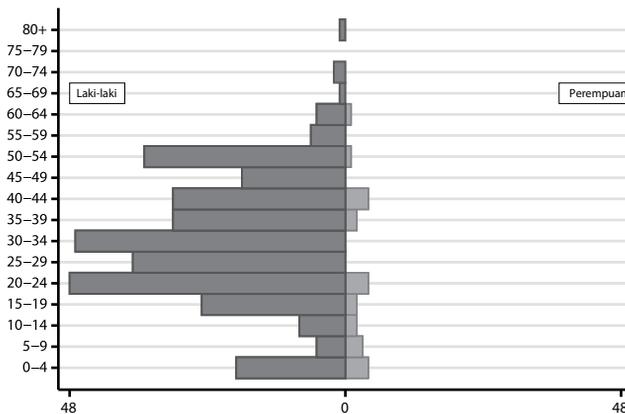
hanya 10,5% dari seluruh pembunuhan anak-anak sipil. Usia median (tengah) korban yang dilaporkan kepada Komisi melalui proses pengambilan pernyataan adalah 14 tahun dan hampir seperempat dari seluruh korban berusia 16-17 tahun.

254. Persentase anak laki-laki dari seluruh laki-laki yang terbunuh mencerminkan gambaran umum dan ini tidak mengherankan karena anak laki-laki adalah mayoritas yang sangat besar dari seluruh kasus 77,6% (281/362). Kelompok terbesar laki-laki yang terbunuh adalah kelompok umur 30-35. Sedangkan perempuan yang dibunuh cenderung lebih muda usianya. Dalam semua kasus perempuan yang dibunuh, lebih daripada seperempatnya berasal dari kelompok umur 0-17 tahun. Kelompok umur 12-17 tahun adalah kelompok kedua terbesar, di bawah kelompok yang sedikit lebih tua, yaitu kelompok umur 18-23 tahun. Agaknya perempuan dalam kedua kelompok umur ini adalah yang paling rentan terhadap kejahatan-kejahatan lain, seperti perkosaan, yang dalam beberapa kasus terkait dengan pembunuhan, walaupun sedikit bukti yang mendukung adanya hubungan ini.²⁰⁰

255. Penghilangan orang memperlihatkan pola umur yang serupa dengan pembunuhan, dengan 7,1% (59/835) korban penghilangan dalam kelompok umur 0-17 tahun dan 32,3% (23/59) kelompok umur 12-17 tahun.

256. Profil demografis umur dan jenis kelamin mengenai sejumlah korban penghilangan yang dilaporkan mirip dengan pembunuhan orang sipil. Khususnya, kebanyakan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi dilakukan terhadap laki-laki muda berumur antara 20 dan 34. Dari penghilangan anak-anak yang dilaporkan, hampir semuanya adalah terhadap anak laki-laki dalam kelompok umur 15-19, seperti diperlihatkan dalam grafik di bawah ini:

Jumlah tindakan penghilangan, berdasarkan umur dan jenis kelamin, 1974 – 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: 59,2% catatan tak memiliki data umur ataupun jenis kelamin korban

Invasi dan operasi militer

1975-1979

257. Sebagaimana dicatat sebelumnya, jumlah terbesar anak-anak dibunuh pada periode dari 1975 sampai dengan 1979 dalam seluruh masa yang menjadi mandat Komisi. Pola ini sejalan dengan seluruh pembunuhan penduduk. Angka tersebut menunjukkan bahwa anak-anak bukanlah target, tetapi terperangkap dalam kekerasan dan kekacauan bersama dengan orang dewasa. Analisis kualitatif yang dilakukan dalam penelitian Komisi juga menunjukkan bahwa pada periode ini anak-anak dibunuh dengan alasan yang sama seperti orang dewasa dan sering pada waktu yang sama dengan orang dewasa.

258. Sejumlah anak mati dalam pertempuran pada saat invasi Indonesia atau sesudahnya dalam operasi-operasi militer terhadap Falintil. Tetapi, dari pernyataan-pernyataan yang diterima Komisi, banyak yang tidak jelas apakah sesuatu pembunuhan disebabkan oleh penyerangan yang membabibuta atau eksekusi dengan sasaran tertentu. Misalnya, pada 1978 empat orang anak dari satu keluarga dari Lupal (Lolotoe, Bobonaro) terbunuh ketika tempat pengungsian mereka di Gunung Manulor diserang oleh tentara Indonesia. Santina da Costa berumur tujuh tahun pada waktu itu. Ia menjelaskan:

Selama dua minggu di gunung, adik laki-laki dan adik perempuan saya, Lesu Bere [umur tidak diketahui], Olandina [umur 5 tahun], dan Olosili [umur 2 tahun], mati setelah kena peluru dari tentara Indonesia, sedangkan seorang lagi bernama Olasila mati karena kena pecahan peluru.²⁰¹

259. Pola kedua kematian anak-anak pada dasawarsa 1970-an adalah anak-anak dibunuh ketika mereka menjadi bagian kelompok yang sedang mencari makanan. Komisi menerima sejumlah laporan yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang sedang mencari makanan menghadapi risiko diserang oleh ABRI (dan pembantunya, seperti anggota-anggota Hansip) maupun oleh Fretilin/Falintil. ABRI menganggap keberadaan kelompok-kelompok seperti itu di hutan mencurigakan karena mereka mungkin bermaksud mengadakan hubungan dengan Resistansi atau bahkan mereka itu sendiri adalah anggota Resistansi. Sedangkan Fretilin/Falintil menjadikan kelompok-kelompok itu sasaran karena dianggap mata-mata atau orang-orang yang akan menyerah (lihat bawah).

260. Pola ini memperjelas salah satu ciri utama konflik politik di Timor-Leste: kegagalan umum untuk membedakan antara orang sipil dan petempur. Kegagalan ini mungkin adalah akibat dari doktrin militer, seperti strategi 'perang rakyat' Fretilin dan strategi Hankamrata ABRI/TNI yang serupa dalam hal ini, yang memberikan pembenaran atas pembentukan satuan-satuan paramiliter dan pertahanan rakyat. Mungkin juga ini akibat dari kecurigaan terhadap semua orang sipil yang didapati di wilayah yang sedang diperebutkan, yang menyebabkan mereka menjadi sasaran militer yang sah. Anak-anak tidaklah terkecualikan atau terlindungi dari kegagalan ini.

261. Komisi mendapatkan kesaksian yang menyebutkan korban sipil di tangan kesatuan-kesatuan ABRI dan Hansip.²⁰²

262. Komisi menerima kesaksian mengenai anggota-anggota Hansip di Uai-Oli (Venilale, Baucau) yang membunuh seorang anak perempuan berumur enam tahun bernama Kenauatu dan ayahnya. Adik laki-lakinya, José Ximenes, menjelaskan bagaimana mereka dibunuh dan bagaimana ia diambil dan diasuh para pelaku pembunuhan itu:

Pada 1978 kami turun dari gunung Matebian menuju Uai-Oli, aldeia Ibihae [Venilale, Baucau]. Seluruh keluarga saya berangkat ke kota Venilale, tetapi saya bersama ayah saya Uatusu'u, kakak perempuan saya Kenauatu tinggal di Uaibae, Uai-Oli. Setelah kira-kira satu minggu, komandan Hansip bernama C36, bersama anggotanya: C37, C38, C39, dan yang lain, menemukan tempat persembunyian kami di Nabolo. Mereka menangkap kakak dan ayah saya dan membawa mereka jauh dari saya sekitar 200 meter. Kemudian mereka dibunuh dan mayatnya dibuang saja di Nobolo, Uaile, Uai-Oli. Tetapi karena saya baru berumur kira-kira lima tahun, C36 dan C37 membawa saya ke Ossu. Sampai di Ossu saya tinggal dengan C37 yang mengasuh saya sampai saya dewasa. Pada 1995, keluarga saya ketemu saya dan bawa saya ke Venilale [Baucau] untuk tinggal bersama dengan mereka.²⁰³

263. Anak-anak yang tertinggal ketika yang lain lari ke hutan juga menghadapi risiko. Felicidade Ximenes mengungkapkan bahwa seorang laki-laki kerabatnya tidak ikut lari dan tinggal bersama anak perempuannya, Helena, berumur 15 tahun, di Uai-Oli (Venilale, Baucau) pada 1979, sedangkan anggota keluarganya yang lain melarikan diri ke hutan. Para anggota Batalion 745 tiba di daerah itu dan disebutkan memaksa laki-laki itu untuk membunuh anak perempuannya sendiri.²⁰⁴

264. Anak-anak juga dibunuh dalam berbagai konteks lain selama periode ini. Seperti ditulis dalam bagian mengenai TBO, ada beberapa kasus TBO di bawah umur dicurigai terbunuh dalam operasi pertempuran atau dibunuh oleh anggota tentara di kesatuan mereka sendiri. Pembunuhan-pembunuhan lain berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang lain, seperti pemerkosaan. Misalnya, menurut Paolo da Costa Soares seorang anggota tentara Indonesia dan seorang anggota Hansip dari Atabae (Bobonaro), C40 dan C41, menangkap dua perempuan bersaudara berumur kurang dari 18 tahun, yang salah satunya sedang hamil enam bulan. Setelah diperkosa selama enam jam oleh dua orang tersebut, kedua perempuan muda ini berusaha melarikan diri. Salah satu dari keduanya ditembak dan meninggal dunia, sedangkan yang hamil menderita keguguran kandungan.²⁰⁵ Gaspar Dias melaporkan tentang suatu kasus pada 1975 yang tampaknya terjadi secara acak. Ia mengatakan bahwa Albano Dias, laki-laki berumur 15 tahun, sedang bekerja di ladangnya di Fatlau (Aileu), ketika ditembak mati oleh seorang prajurit ABRI yang tidak diketahui identitasnya.²⁰⁶

1980-1988

265. Pada 1980 Indonesia telah mengonsolidasikan penguasaannya atas Timor-Leste. Banyak orang sipil telah menyerah atau tertangkap dan dipindahkan ke berbagai kota atau desa. Serangan-serangan Falintil terus berlanjut dan tindakan-tindakan balasan oleh ABRI dan berbagai operasi lainnya sering sasarannya begitu luas sehingga di antara yang mati terdapat anak-anak. Seperti dalam periode sebelumnya, anak-anak tidak khusus dijadikan sasaran, tetapi terbunuh di dalam kelompok yang ada orang dewasanya. Tetapi, konteks dari pembunuhan ini bukan lagi invasi atau serangan udara seperti yang terjadi pada periode sebelumnya, melainkan merupakan tindakan pembalasan terhadap perlawanan aktif yang terus berlanjut terhadap pendudukan. Juga ada jenis baru operasi militer seperti serangkaian operasi 'pagar betis' yang dikenal sebagai Operasi Kikis yang melibatkan mobilisasi besar-besaran penduduk sipil untuk menghabisi pejuang Resistansi. Yang paling dikenal dari operasi ini terjadi pada Juli-September 1981 (lihat Bagian 3: Sejarah konflik, dan Bagian 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan).

266. Anak-anak sering terperangkap ketika terjadi pembunuhan terhadap kelompok. Contohnya, anak-anak dilaporkan ada di antara korban-korban pembunuhan yang terjadi di Uaidada, Desa Cairui (Laleia, Manatuto) pada akhir Operasi Kikis pada September 1981.²⁰⁷ Di Desa Leuro (Lospalos, Lautém) masyarakat menggambarkan keadaan menjelang Operasi Kikis berakhir:

*Masyarakat semakin takut, trauma dan tidak tenang, tidak bebas melakukan sehari-hari karena ABRI selalu jaga di sejumlah pos.*²⁰⁸

267. Masyarakat mengatakan bahwa 10 orang ditembak mati pada waktu itu, termasuk seorang anak berumur 15 tahun bernama Jepokilu.

268. Banyak anak juga terbunuh dalam serangkaian pembunuhan di Distrik Viqueque oleh ABRI dan Hansip sebagai pembalasan atas pembunuhan 14 prajurit di Desa Kraras, Bibileo (Viqueque) pada 8 Agustus 1983. Komisi telah menerima keterangan bahwa paling sedikit 26 dari para korban berumur 17 tahun atau lebih muda dan di antaranya lebih daripada separuhnya berumur 10 tahun atau kurang.^{*} Silvino das Dores Soares mengisahkan bahwa pada beberapa minggu setelah kematian para prajurit ABRI, militer berpatroli di gunung-gunung di sekitar tempat itu dan sejumlah eksekusi dilakukan dalam operasi-operasi ini, termasuk terhadap seorang anak berusia 15 tahun di Uma Qui'ic (Viqueque) sekitar 12 September 1983.²⁰⁹

269. Dalam salah satu tindakan pembalasan setelah pemberontakan Kraras, pembunuhan di *aldeia* Fahite-Laran, Carau-Balo (Viqueque, Viqueque) pada 16 September 1983, meliputi banyak perempuan dan anak-anak kecil. Seorang mantan komandan Hansip, Jerónimo da Costa Amaral mengatakan kepada Komisi:

* Pernyataan HRVD 02130501, Daftar nama korban dalam laporan Korban; Pernyataan HRVD 04146 juga mengidentifikasi dua anak di antara yang terbunuh dalam satu insiden yang berhubungan dengan Kraras pada 17 September 1983 di sawah Tahu-Bein, Baha Fou (Buicaren, Viqueque): Eugenio (14 tahun) dan Abílio Gomes (16 tahun).

Pada suatu hari sekitar pukul 2 siang, 12 orang tentara panggil kami, dari kesatuan mana saya tidak tahu...Saya bersama tiga orang anggota saya.... membawa 18 orang [penduduk sipil]. Ada yang hamil tua, ada yang punya anak kecil, dan ada beberapa laki-laki tua. Kami membawa mereka ke atas...sampai Karuik...Pasukan Indonesia dari tempat lain datang menjemput mereka. Saya melihat tertulis di lengan seragam Yonif 312. Kemudian, [para prajurit itu] bilang kepada kami bahwa mereka membawa orang ini untuk bertemu dengan keluarganya [yang masih berada di hutan] dan memanggil mereka untuk menyerahkan diri. Para prajurit dan 18 orang itu belum jalan jauh, kami mendengar letusan senjata.²¹⁰

270. Para saksi lain menyebutkan jumlah korban antara 26 dan 54 orang, tetapi semuanya setuju bahwa banyak perempuan dan anak-anak kecil dalam kelompok itu. Komisi menemukan bahwa 14 anak dibunuh dalam pembantaian ini, berumur antara satu dan 17 tahun (pembantaian Caraubalo dan Tahu Bein, diuraikan dalam Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Keesokan harinya di Tahu Bein (Viqueque) tentara mengepung dan menembak semua laki-laki, termasuk yang remaja, dari Desa Bahalarauain. Sembilan orang dari korban yang dilaporkan adalah anak di bawah umur, satu berumur 10 tahun dan selebihnya antara 15-17 tahun.

271. Dalam dasawarsa 1980-an jaringan klandestin meluas dengan pesat. Anak-anak menjadi terlibat dalam kegiatan-kegiatan jaringan ini sebagai *estafeta* atau pembawa pesan. Ini menempatkan anak-anak pada risiko tertangkap dan bahaya dari pihak militer. Laporan paling awal mengenai kematian anak-anak klandestin terjadi setelah terjadinya serangan Resistansi di Marabia dan Becora (Dili) pada 10 Juni 1980. Setelah serangan itu, pihak berwenang Indonesia meluncurkan gelombang penangkapan dan penahanan. Filomeno Ximenes melaporkan bahwa di antara yang ditangkap dan hilang atau yang dibunuh ketika dalam tahanan, adalah tiga orang tahanan berusia 15-17 yang hilang dari Penjara Comarca Balide. Mereka termasuk Sancho Sarmento (17 tahun) dan dua bersaudara, Cesmundo (15 tahun) dan Edmundo (16 tahun), yang diidentifikasi sebagai anggota gerakan bawahan. Menurut Filomeno, mereka ditangkap Kodim 1627 di Mercado Lama, Dili.²¹¹

1989-1998

272. Jaringan klandestin semakin meluas setelah 1988 dan berbagai kelompok baru bermunculan di kalangan pelajar sekolah menengah dan mahasiswa universitas. Penyelenggaraan demonstrasi terbuka mulai 1989 dan memerlukan pengerahan orang dalam jumlah besar yang bersedia menghadapi risiko penahanan dan kekerasan. Anak-anak dan pemuda sangat banyak terlibat. Ketika para demonstran menghadapi kekerasan, seperti yang terjadi pada Pembantaian Santa Cruz 12 November 1991, korban di bawah umur jumlahnya besar. Dari 271 yang tercatat terbunuh di Santa Cruz, 42 orang berusia di bawah 17 tahun, ini mencakup beberapa orang yang berumur 10 tahun.²¹² Ada satu petunjuk bahwa sebagian dari korban ini

sengaja dijadikan sasaran dalam kekerasan tersebut. Menurut Belchior Francisco Bento Alves Pereira:

*Tidak lama setelah tiba di Santa Cruz tentara Indonesia mulai tembak, sehingga saya sembunyikan diri di dekat tembok kuburan. Pada saat itu saya melihat polisi masuk melakukan pemeriksaan di dalam kuburan Santa Cruz. Tentara yang ada di dalam kuburan Santa Cruz menusuk orang secara membabibuta. Tidak lama saya dengar Alau memanggil nama saya, Abessy, dan mengatakan ingin mencari anak-anak sekolah dari Santo Paulus. Dia panggil saya dan suruh saya duduk di atas sebuah kuburan lalu seorang polisi pukul saya sampai babak belur.**

273. Anak lelaki dan perempuan terlibat dalam berbagai demonstrasi massal dan mengalami luka-luka. Pada Juni 1998, serangkaian demonstrasi, demonstrasi balasan dan bentrokan terjadi pada waktu kunjungan satu delegasi Uni Eropa. Dua lelaki muda terbunuh dalam dua peristiwa yang terpisah. Dua orang anak perempuan, Dirce Elisabet do Rosário (15 tahun) dan Maria Imaculada do Rosário (17 tahun), ada di antara orang-orang yang luka parah karena pasukan keamanan menembaki demonstran di luar tempat kediaman Uskup Basilio Nascimento di Baucau (di tempat ini delegasi Uni Eropa akan menemui sang uskup) setelah sebuah kendaraan milik intelijen Indonesia dikepung massa.²¹³

1999

274. Kekerasan yang dilakukan oleh TNI dan milisi pada 1999 memperkuat pola yang sudah terbentuk sebelumnya: anak-anak dibunuh dalam pembantaian, sebagai anggota komunitas yang dicurigai prokemerdekaan, atau sebagai pendukung prokemerdekaan itu sendiri. Pembunuhan juga terjadi dalam peristiwa penghukuman kolektif sebagai ganjaran untuk tindakan membantu Falintil atau penyerangan terhadap TNI.

275. Banyak anak terbunuh dalam kekerasan yang terjadi pada 1999, baik sebelum maupun sesudah Jajak Pendapat. Raimundo Sarmento, seorang pemimpin Resistansi dari Laclubar (Manatuto), menguraikan pembalasan yang terjadi menyusul pembunuhan seorang prajurit TNI oleh Resistansi. Ia mengungkapkan bagaimana militer (Marinir, Rajawali, dan Batalion 741) bersama dengan milisi pergi ke setiap rumah yang mereka curigai menyembunyikan Raimundo dan akhirnya menangkap dan membunuh Marcelino, seorang tokoh Resistansi dan adiknya, yang bersekolah di sekolah menengah pertama:

.....
* Belchior Francisco Bento Alves Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004. Bagian mengenai "anak dalam jaringan klandestin" mencatat bahwa setelah Santa Cruz demonstran-demonstran di bawah umur dicari-cari di sekolah-sekolah dan rumah-rumah mereka dan ditangkap.

Tanggal 24 April 1999, pagi pukul 10.00, mereka sudah masuk [ke tempat Raimundo]...mereka melewati kali, melewati tempat-tempat persembunyian. Mereka masuk dari bawah langsung menangkap penanggungjawab utama saya yang bernama Marcelino dan seorang anak laki-laki... bernama Mateus... Marcelino dan Mateus dikubur, mereka betul-betul dibunuh, kepalanya dipotong dan ditukarkan baru dikubur dalam posisi duduk dengan tubuh melingkar.²¹⁴

276. Pernyataan lain yang diperoleh Komisi menyebutkan kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi milisi di tempat pembunuhan tersebut.²¹⁵

277. Banyak pemuda yang melarikan diri ke pegunungan menjelang pemungutan suara Jajak Pendapat atau dalam kekerasan yang terjadi sesudahnya. Ketika makanan menjadi langka, kembali terjadi pola, setelah dua dasawarsa berlalu, pembunuhan terhadap orang yang melarikan diri ke pegunungan dan kemudian kembali untuk mencari makanan. Jorge Ximenes menyampaikan kepada Komisi mengenai pembunuhan seorang laki-laki berumur 17 tahun:

Pada 21 September 1999, saya dengan teman-teman Felix da Costa, Horacio Pinheiro, Olivio, Joanico, Elias, Alfredo Araújo dan Calisto Rodrigues [17 tahun] dengan 20 teman lainnya datang mencari makanan di Ira Ara, Desa Parlamento, Moro [Lautém], karena di lokasi pengungsian kami bahan makanannya terbatas. Tidak disangka sekelompok milisi Tim Alfa di bawah Komandan C109 menembak kami hingga kami melarikan diri dan teman saya yang bernama Alfredo Araújo tertembak mati dengan Calisto Rodrigues. Setelah lewat 10 hari kami mengambil mayatnya untuk disemayamkan.²¹⁶

278. Dalam beberapa pembunuhan yang paling mengerikan yang terjadi pada 1999, sasarannya adalah laki-laki dewasa yang dipisahkan dari perempuan dan anak-anak sebelum pembunuhan dilakukan. Inilah yang terjadi ketika pada 5 September, milisi memaksa keluar orang-orang yang mengungsi di kompleks Dioses Dili.²¹⁷ Perempuan dan anak-anak juga dipisahkan dari laki-laki di Passabe (Oecussi) di mana sekitar 47 orang muda dibunuh milisi Sakunar pada 10 September.²¹⁸

279. Tetapi, Pembantaian Gereja Suai 6 September tidak demikian dan anak-anak juga dibunuh. Ketika 27 mayat digali dari tiga kuburan massal yang berisi korban-korban Pembantaian Suai (Covalima) pada November 1999, ditemukan sisa-sisa tubuh seorang anak yang berusia kira-kira lima tahun dan seorang perempuan belasan tahun.²¹⁹ Dalam satu kasus terkenal lainnya, pembunuhan dilakukan oleh kelompok milisi Tim Alfa di Lospalos (Lautém). Pada 25 September 1999, Tim Alfa menyerang sebuah mobil, membunuh dua biarawati, tiga biarawan, seorang perempuan awam, seorang wartawan Indonesia, dan sopir mereka. Dua anak laki-laki yang sedang mendorong kereta di jalan sebelum penyerangan tersebut dikejar oleh milisi. Izino Freitas Amaral tidak melarikan diri. Ia diikat di sebatang pohon di mana ia menyaksikan eksekusi mereka yang ada di dalam mobil dan kemudian dibunuh.²²⁰

280. Dalam satu di antara kasus-kasus yang dilaporkan mengenai pembunuhan anak-anak pada 1999, si korban khusus dijadikan sasaran sebagai pengganti orangtuanya. Dalam pembunuhan besar-besaran di Kantor Kepolisian Maliana (Bobonaro) pada 8 September 1999:

Di antara para korban yang pertama, ada seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, José Barros Soares, yang dibacok milisi di depan adik perempuannya. Tetapi kekerasan itu tidak seacak seperti yang dikesankan oleh adegan itu. Para penyerang itu jelas-jelas mengincar tokoh-tokoh prokemerdekaan untuk dibunuh. Korban-korbannya termasuk sejumlah pemimpin CNRT, selain seorang camat, dua orang kepala desa, dan beberapa orang pegawai negeri yang bersimpati prokemerdekaan.

Para milisi itu juga menargetkan keluarga tokoh-tokoh itu. Menurut satu laporan, misalnya, para milisi yang membunuh José Barros Soares, anak laki-laki kecil itu mengatakan kepada adik perempuannya bahwa mereka membunuhnya karena tidak dapat menemukan ayahnya, seorang tokoh kemerdekaan yang dikenal.²²¹

281. Menurut informasi lain yang diterima Komisi, ayah José Barros Soares, seorang pengurus CNRT dari Manapa (Cailaco, Bobonaro), sedang diburu para anggota milisi Dadurus Merah Putih dan TNI, tetapi ia sudah lari ke Dili. Mereka membunuh anaknya sebagai gantinya.²²²

282. Dalam satu kasus lain di Bobonaro, dua orang anak laki-laki dibunuh ketika mereka tidak mau meninggalkan ayah mereka yang baru saja ditembak mati oleh anggota TNI dari Koramil Maliana. Pada 10 September 1999, TNI datang ke rumah Duarte Gouveia Lopes, seorang pengurus CNRT di Holsa, Maliana (Bobonaro) dan menembak matinya di depan kedua anak laki-lakinya, Viriato berumur 17 tahun dan Vitorino berumur 12 tahun. Para prajurit tersebut menyuruh anak-anak itu pergi, tetapi ketika mereka menolak dan mengatakan mereka lebih suka dibunuh juga daripada hidup tanpa ayah mereka, mereka juga dibunuh.²²³

283. Beberapa orang anak dibunuh bersama anggota keluarga mereka yang dikenal sebagai pendukung prokemerdekaan. Maria Santina Tilman Alves menceritakan bagaimana adik perempuannya, Georgina Tilman, dibunuh bersama lima orang anaknya, yang terkecil baru berumur dua tahun. Keluarga Georgina dikenal sebagai pendukung kemerdekaan. Rumah mereka di Ermera dibakar milisi setelah Jajak Pendapat. Georgina melarikan diri bersama suami dan anak-anaknya ke Dili. Ia dan lima orang anaknya dibawa ke kantor Kepolisian Daerah (Polda), di mana sudah banyak yang dikumpulkan untuk menunggu deportasi dan kemudian dikirimkan ke Atambua (Belu, Timor Barat). Suaminya kehilangan kontak dengan Georgina dan kelima orang anaknya. Kemudian ia mengetahui bahwa setelah tiba di Atambua, TNI dan anggota-anggota milisi (C47 dan C48, dua anggota Kodim 1637 Ermera dengan C49 dan C50) membawa Georgina dan anak-anaknya dengan mobil kembali ke Timor-Leste, ke Manduki (Atabae, Bobonaro). Ia kemudian mengetahui bahwa

mereka ditembak di Manduki dan mayatnya ditinggal tanpa dikubur. Mertua dari pengemudi mobil itu kemudian pergi menguburkan mayat-mayat itu dan pakaian anak-anak itu ditinggalkan sebagai tanda. Merekalah yang memberi tahu suami Georgina apa yang terjadi pada Georgina dan anak-anak itu.²²⁴

Pembunuhan anak-anak oleh Fretilin dan Falintil

284. Fretilin dan Falintil bertanggung jawab atas sekitar seperempat dari pembunuhan terhadap anak-anak yang dilaporkan dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi, 38 korban dalam 20 kejadian. Sebagaimana halnya dengan pembunuhan yang dilakukan oleh TNI, kebanyakan anak dibunuh sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar yang terdiri atas orang dewasa. Selain pernyataan-pernyataan ini, ada keterangan-keterangan lain yang dapat dipercaya mengenai remaja aktivis partai yang dibunuh oleh Fretilin maupun UDT.

Periode konflik partai

285. Anak-anak dalam jumlah yang tidak diketahui dibunuh oleh anggota-anggota partai politik sebelum dan sesudah invasi tentara Indonesia, karena hubungan keluarga atau karena afiliasi politik mereka sendiri. Angelo Araújo Fernandes, seorang pendukung UDT, mengungkapkan kepada Komisi mengenai pembunuhan keluarga besarnya pada 1976 oleh beberapa anggota Fretilin dari desanya sendiri. Setelah ditahan Fretilin selama beberapa hari, ia menyaksikan pembunuhan saudara lakinya, tetapi ia sendiri berhasil melarikan diri. Menurut Fernandes:

*mereka kembali dan menembak mati semua keluarga saya yang berjumlah 37 orang di Desa Lahiria [Loré I, Lautém] termasuk anak-anak dan perempuan hamil. Saya hanya mendengar letusan senjata dari arah Lahiria, tempat mereka berada.**

286. Filomeno Pedro Cabral Fernandes adalah seorang aktivis UDT dari satu keluarga yang beranggotakan pendukung-pendukung Fretilin dan Apodeti. Bersama dengan ayahnya, seorang pemimpin Apodeti, ia ditahan di Dili dan dibawa ke Aileu setelah invasi tentara Indonesia:

Saya tidak tahu persis mengapa saya jadi tahanan politik, atau apakah ditahan karena orangtua saya. Pada 26 Desember 1975 malam, kami dengar bunyi senjata. Setelah kami mengonfirmasi, ternyata ayah saya bersama 75 orang tahanan lainnya dibunuh pada saat itu di Mantane [Aileu Vila, Aileu]. Di antara mereka yang dibantai usianya paling muda adalah António Pinto dan Rui Maia. Mereka berdua usianya 15 tahun waktu itu. Saya dan Jerónimo Maia berusia 16 tahun. Kami empat orang masih kecil.²²⁵

* Untuk keterangan yang lebih terperinci lihat boks dalam Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan pemindahan paksa, berjudul "Kesaksian Angelo Araújo Fernandes: Pembunuhan oleh Fretilin di Lautém."

287. Ada juga berbagai bukti mengenai pembunuhan pendukung Fretilin yang masih di bawah umur oleh pendukung UDT pada periode ini. Ijidio Maria de Jesus berbicara pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian mengenai pembunuhan ayahnya José Maria dan sepuluh orang lainnya oleh anggota UDT. Enam dari yang dibunuh pada 27 Agustus 1975, di Wedauberek (Alas, Manufahi) adalah anggota Unetim, perhimpunan pelajar yang berafiliasi dengan Fretilin, termasuk salah seorang adik Nicolau Lobato, Domingos Lobato. Mereka ditahan sejak 11 Agustus dan ditahan di Alas, kemudian di Same (Manufahi) dan Natarbora (Manatuto), sebelum kembali ke Besusu (Alas, Manufahi) pada 27 Agustus, di mana Ijidio melihat ayahnya duduk di belakang sebuah truk yang lewat.

288. Pada pukul 14.00, Ijidio dan ibunya, ketika melarikan diri ke hutan, mendengar suara-suara tembakan dari Meti-Oan. Empat hari kemudian ia mendengar kabar bahwa penduduk Besusu (Alas, Manufahi) telah menemukan 11 mayat di dekat Meti-Oan, termasuk mayat ayahnya dan ia pergi ke sana untuk melihat. Tangan salah seorang pelajar yang mati, Domingos Ribeiro, telah dipotong dari tubuhnya. Selain Domingos Ribeiro, di antara siswa-siswa itu ada ketua Unetim, Domingos Lobato, dan empat orang anggota lain Unetim, Chiquito Kaduak, Francisco, Alexandre da Costa, dan adik laki-laki Domingos Ribeiro yang berusia 17 tahun, Tonito Ribeiro.*

289. Dalam kasus yang lain, Vicente Rosário mengungkapkan bagaimana anggota UDT di Desa Baltalde-Merkoluli (Turiscai, Manufahi), C109 dan C110, membunuh keluarga Vincente karena mereka adalah anggota Fretilin. Dari enam korban meninggal, tiga masih anak-anak: Dau Mali (tujuh tahun), Malolo (enam tahun), dan Luru Leki (lima tahun).²²⁶

290. Beberapa pernyataan mengesankan bahwa selama periode ini ada anak-anak yang dibunuh karena sengketa pribadi dan keluarga yang sudah lama ada maupun karena perbedaan politik. Menurut pernyataan Manuel da Silva mengenai satu insiden di Aitutu (Maubisse, Ainaro):

Pada 1975, saya UDT tetapi tidak melakukan apa-apa terhadap Fretilin. Anggota mereka datang membawa Koli-bere I [umur 16 tahun] dan Koli-Bere II [umur 16 tahun]... [Pelakunya] adalah C51, C110, dan C111. Tiga orang itu membawa dua tahanan tersebut dan kemudian menyerahkan mereka kepada delegado Fretilin, C112 yang menyuruh C113 membunuh kedua Koli-bere. Mereka berdua tidak punya kesalahan apa-apa tetapi mereka dibunuh hanya balas dendam karena mereka masuk partai UDT dan karena masalah adat keluarga.²²⁷

* CAVR, Ijidio Maria de Jesus, *Koleksi Ringkasan Kasus*, 2003. Walaupun hanya umur Tonito yang disebutkan, Unetim adalah organisasi pelajar sekolah menengah dan beberapa orang lainnya kemungkinan masih di bawah umur.

1975-1979

291. Pembunuhan anak-anak oleh Fretilin dan Falintil setelah invasi Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa kategori: pembunuhan yang berhubungan dengan konflik di dalam partai atau antarpolisi, pembunuhan orang yang dicurigai membantu tentara Indonesia (termasuk kematian dalam tahanan dan pembunuhan orang yang dibunuh ketika mencari makanan) dan serangan militer.

292. Pernyataan-pernyataan menunjukkan bahwa imbas dari konflik partai dirasakan lama setelah invasi tentara Indonesia dan bahwa anak-anak terus saja menjadi korban. Lorenço Ximenes menyampaikan tentang penangkapan keluarganya, yang adalah anggota-anggota Apodeti, di Baucau pada Oktober 1976:

Saya bersama keluarga saya mengungsi ke Nai Naha [Quelical, Baucau] karena takut serangan ABRI. Di Nai Naha mereka ditangkap oleh pasukan Falintil karena dicurigai ada kontak dengan ABRI. Tangannya diikat lalu diikatkan pada kayu besar selama tiga hari dan diinterogasi. Mereka dilepaskan kembali dengan dipaksa untuk bekerja mengangkat dan membawa tanah untuk membuat fondasi sebuah rumah hingga selesai. Kemudian tanggal 2 November 1976 keluarga dipaksa untuk menggali lubang sekitar lima meter. Setelah selesai menggali, Lourenço Ximenes sembunyi diri dan melihat pasukan Falintil membunuh tiga korban antara lain anaknya Filomeno [Ximenes, umur 12 tahun], keponakannya Quii Quele [20 tahun] dan adiknya Laca Labi [umur tidak diketahui]. Setelah dibunuh, mayat ketiga korban dimasukkan dalam lubang yang sudah digali.²²⁸

293. Komisi juga telah menerima pernyataan-pernyataan mengenai beberapa insiden dalam mana Fretilin/Falintil membunuh orang-orang yang dicurigai membantu Indonesia. Pada beberapa kasus, kematian terjadi dalam penahanan, dalam kasus lain setelah kelompok yang keluar untuk mencari makanan bertemu dengan prajurit Falintil. Setelah invasi, Fretilin menahan orang yang dicurigai sebagai kolaborator dan tahanan politik di pusat-pusat rehabilitasi politik (Renal). Kematian dalam penahanan terjadi akibat eksekusi dan penyiksaan, selain juga karena kekurangan makan dan dibiarkan begitu saja (lihat kasus Bastião da Silva yang diuraikan di atas dalam bagian mengenai Penahanan oleh Fretilin, pada catatan kaki paragraf 244).

294. Pada April 1976, Mariano Lopes berumur 10 tahun ketika ia dan keluarganya lari dari Koliata-Leo Telo (Hatolia, Ermera) ke Letefoho (Ermera) sebelum kampung mereka diserbu tentara Indonesia. Bulan berikutnya keluarga itu pergi ke kebunnya untuk memanen ubi jalar:

Pada Mei 1976, kami takut karena lapar, saya bersama ibu saya Bimori dan kakak saya Lakamau, Bibi Sara, dan ipar saya Afonso dengan kakak saya Joaquina, dari Letefoho berangkat ke kebun untuk menggali ubi jalar. Di dalam kebun seorang anggota Fretilin C52 menangkap ibu saya, saudari-saudari perempuan, dan saya, dan

*kami dibawa ke Hauhei...Sesampai di jurang Manufunu, mereka menembak secara membabitua. Butir peluru mengenai saudari saya [dan] Joaquina jatuh ke jurang. Saya tiarap ke tanah, butir peluru kena di pipi kanan saya sampai robek. Ibu saya Bimori dan kakak saya Lakamau, langsung mati di tempat. Dipikir bahwa kami meninggal semua, mereka lepas begitu saja dan pergi. Bibi Sara dan ipar Afonso, mereka sempat lari ketika mendengar bunyi senjata. Melihat tempat sudah sepi mereka datang untuk membawa lari saya bersama dengan saudari Joaquina kembali ke Letefoho. Dua tahun kami tinggal di Letefoho baru kembali lagi. **

295. Ada berbagai alasan lain mengapa anggota Fretilin atau Falintil membunuh anak-anak. Orang-orang, termasuk anak-anak, kadang-kadang dibunuh sebagai contoh untuk masyarakat. Bernardo Rodrigues melaporkan kepada Komisi bahwa adiknya, Abrão (umur 17 tahun) bersama dengan satu anggota keluarga lainnya dibunuh di muka umum pada Maret 1978 di Lequidoe (Aileu). Kedua pemuda itu berusaha mencuri jagung milik seorang laki-laki bernama C53. C53 menangkap mereka dan menahan mereka selama satu malam, kemudian menyerahkan mereka kepada pasukan Fretilin. Mereka ditembak mati oleh pasukan Fretilin di muka umum atas perintah dari *Adjunto* C54.²²⁹

296. Dalam kasus lain, Armindo Barreto mengisahkan tentang seorang Falintil yang berusaha membunuh anak bayi Armindo yang berumur satu bulan, bernama Domingas, pada 1978 di Zumalai (Suai, Covalima) karena bayinya menangis dan dapat membuat tentara Indonesia mengetahui tempat mereka:

Anak saya kedinginan dan lapar, lalu menangis. Anak itu digendong oleh ibunya. Baru satu bulan umurnya, namanya Domingas. Tidak lama kemudian anggota Falintil bernama António panggil satu kali. Kami masih terus berjalan. Panggil kedua kali pun sama, dan yang ketiga kali, saya katakan pada istri saya Arminda Amaral, "Daripada kamu yang dibunuh oleh Falintil, lebih baik biarkan dia membunuh anak itu." Dari situ kami berjalan sekitar 100 meter. Falintil itu datang dan mengambil anak itu dari gendongan ibunya, dia tarik lalu cekik leher anak itu kemudian buang ke sungai di Bemea. Kami pun takut, kami berjalan terus, kami berjalan sudah jauh, saya dengar bayi itu belum meninggal, bayi itu masih menangis. Kemudian saya suruh seorang Falintil bernama Olivio dos Santos untuk membawa satu lembar kain sarung untuk membalut bayi itu. Lalu kami berjalan terus. Tidak tahu anak itu hidup atau meninggal dunia. Kami tidak tahu lagi, karena kami sudah jauh dan hampir dekat di Gunung Kolimau [Bobonaro] mau melanjutkan perjalanan ke Fatubessi [Hatolia, Ermera]...²³⁰

* Pernyataan HRVD 06221; ada lima kasus pada 1976-1978 yang menyangkut 13 orang korban dari Aileu, Ermera, dan Manufahi, di mana para korban adalah bagian dari satu kelompok yang keluar untuk mencari makan. Lihat Pernyataan HRVD 02056, 04095, 04604, dan 04992.

Serangan Falintil

297. Ada satu keterangan mengenai seorang anak yang dibunuh dalam operasi Falintil. Paterno Soares melaporkan kepada Komisi bahwa adik perempuannya bernama Ines Soares, berumur 14 tahun, dibunuh ketika Falintil menyerang Desa Carlilo (Manatuto, Manatuto) pada 1982. Para pejuang itu membakar sejumlah rumah di desa tersebut, termasuk rumah Paterno. Ines, bersama dengan orangtuanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam kobaran api.²³¹ Sementara Falintil sekali-sekali membunuh orang sipil yang menjaga pos keamanan ABRI, sedikit sekali bukti bahwa anak-anak menjadi korban dari serangan seperti itu yang diperoleh Komisi.

Kekerasan seksual

298. Kejadian kekerasan seksual selama masa mandat Komisi, penyebab, serta akibatnya, dibahas dengan terperinci dalam Bab 7.7: Kekerasan Seksual dari Laporan ini. Akan tetapi, kasus-kasus kekerasan seksual yang korbannya anak-anak dibahas secara terpisah dalam bagian ini untuk mengangkat pengalaman khusus anak-anak dalam konteks ini. Kekerasan seksual mungkin adalah pelanggaran terkejam dan merupakan pelanggaran yang paling merusak perasaan dan kejiwaan yang bisa diperbuat terhadap anak-anak; ini adalah suatu pengkhianatan terhadap kemurnian anak-anak.

299. Dalam bab mengenai kekerasan seksual, Komisi mengadopsi definisi kerja kekerasan seksual sebagai semua bentuk dari “kekerasan, baik fisik maupun psikologis, yang dilakukan dengan cara-cara seksual atau dengan sasaran seksualitas.”²³² Definisi ini mencakup pemerkosaan, yaitu penyerangan fisik yang bersifat seksual, yang dilakukan terhadap orang dalam keadaan yang bersifat menekan. Ini merupakan tindakan seks yang terjadi tanpa persetujuan dari korban.* Perbudakan seksual juga termasuk dalam definisi tersebut.†

300. Penelitian Komisi menemukan bahwa korban pelanggaran seksual yang dilaporkan yang berhubungan dengan konflik politik hampir seluruhnya adalah perempuan, khususnya dalam pemerkosaan dan perbudakan seksual. Seperti di banyak masyarakat lain, kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan remaja di Timor-Leste bisa terkait erat dengan posisi mereka dalam masyarakat. Hal ini mencakup pandangan stereotipikal yang secara ketat membedakan lelaki dan perempuan, dan status sosial perempuan yang umumnya lebih rendah, yang

* Permeksosaan adalah penetrasi seksual, walau sekecil apapun: (a) terhadap vagina atau anus dari korban oleh penis dari pelaku atau benda apapun yang digunakan oleh pelaku; atau (b) terhadap mulut dari korban oleh penis dari pelaku, dengan pemaksaan atau kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan terhadap korban atau orang ketiga. Ini adalah definisi tindak pemerkosaan dari kasus Furundzija pada Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia.

† Perbudakan seksual terjadi jika perempuan dewasa dan anak-anak direnggut kebebasannya, dipaksa ke dalam “perkawinan”, penghambaan rumah tangga atau kerja paksa lain yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual tanpa persetujuan, termasuk pemerkosaan oleh orang-orang yang menahan mereka. Keadaan keseluruhannya harus dikaji untuk memastikan apakah kuasa kepemilikan telah dijalankan atas diri manusia lain.

mendorong sikap-sikap yang menganggap bahwa perempuan adalah objek yang bisa dimiliki dan digunakan sekehendak lelaki.

301. Dalam hubungannya dengan anak-anak, dampak dari sikap seperti itu diperparah oleh kerentanan fisik dan emosional yang lebih tinggi pada anak-anak. Konteks dari konflik yang keras tanpa adanya aturan hukum yang berfungsi kerap berarti bahwa orang-orang pada posisi yang lebih kuat atas anak-anak dapat memanfaatkan kesempatan dalam suatu suasana yang terbebas dari hukum. Jadi, sekali lagi, anak-anak didesak ke garis depan konflik.

302. Dari seluruh kasus yang didokumentasikan mengenai kekerasan seksual, 14,9% (127/853) dilakukan terhadap anak-anak. Dari seluruh kekerasan seksual terhadap anak-anak tersebut, 98,4% (125/127) dilakukan terhadap anak-anak perempuan. Akan tetapi harus dicatat bahwa 33,9% (289/853) dari kekerasan seksual yang dilaporkan kepada Komisi, umur korban tidak tercantum.

303. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai kekerasan seksual, ada stigma kuat yang melekat pada korban kekerasan seksual, yang berarti bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini sungguh sering tersembunyi di balik dinding ketakutan dan kebungkaman. Dalam budaya yang menjunjung tinggi keperawanan, inilah yang sering terjadi bagi korban anak-anak. Oleh karena itu sangat mungkin bahwa jumlah kejadian kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilaporkan sebenarnya jauh lebih rendah daripada yang sesungguhnya terjadi.

304. Yang terakhir, penting dicatat bahwa seksualitas terikat dengan norma kebudayaan dan sosial. Tidak ada batasan usia internasional seseorang dianggap cukup dewasa untuk menyetujui ajakan seks, tetapi menurut Konvensi Hak Anak, anak-anak umumnya adalah orang muda berusia di bawah 18 tahun. Ini adalah usia mayoritas yang digunakan dalam Laporan ini.

305. Sejak 1990 Indonesia menjadi negara peserta Konvensi Hak Anak, tetapi pengesahannya bergantung pada hukum Indonesia sendiri. Undang-undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak mulai berlaku tanggal 23 Juli 1979 dan menetapkan bahwa anak-anak adalah siapa saja yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Usia sah untuk menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Di Timor-Leste, seorang perempuan dianggap sebagai orang dewasa jika ia sudah menikah. Tetapi, Komisi percaya bahwa persetujuan untuk tindakan seksual menjadi batal oleh bentuk penahanan atau pemaksaan apapun, baik yang bersifat fisik, psikologis, atau yang berhubungan dengan keadaan. Usia persetujuan sebetulnya tak ada hubungannya dengan jenis kekerasan seksual yang diselidiki Komisi.

Pola pelanggaran

306. Dari kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilaporkan kepada Komisi, 41,0% (61/127) adalah perkosaan, 35,4% (45/127) adalah perbudakan seksual, dan 16,5% (21/127) adalah tindakan-tindakan kekerasan seksual lainnya.

307. Dari 72,8% (91/125) kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, korban berusia antara 14 dan 17 tahun. Dari semua kekerasan seksual terhadap anak-anak yang didokumentasikan oleh Komisi, 68,5% (87/127) terpusat di lima distrik, yaitu Ermera 19,7% (25/127), Ainaro 15,0% (19/127), Manufahi 13,4% (17/127), Bobonaro 10,2% (13/127), dan Aileu (10,2% (13/127).

308. Kekerasan terbesar terhadap anak-anak di bawah umur yang didokumentasikan Komisi terjadi selama periode konflik ketika pelanggaran fisik, pembunuhan, dan penghilangan juga sering terjadi. Misalnya, 70,9% (90/127) dari kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur terjadi antara 1975 dan 1983, dan 12,6% (16/127) pada 1999. Pola sementara kekerasan seksual terhadap orang dewasa dan anak-anak berkorelasi positif. Ketika kekerasan seksual terhadap orang dewasa cenderung naik atau turun begitu pula kekerasan seksual terhadap anak-anak.[†] Pola ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak-anak didorong oleh faktor yang sama dengan yang terjadi terhadap orang dewasa.

309. Militer Indonesia disebut sebagai pelaku dalam 72,4% (92/127) kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilaporkan, 34,7% (44/127) dilakukan oleh orang Timor-Leste yang bergabung dengan militer Indonesia, dan 2,4% (3/127) oleh pasukan Fretilin/Falintil. Tidak ada kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan oleh UDT.

1974-1979

310. Sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang dilaporkan kepada Komisi terjadi pada periode kekerasan dan kekacauan dalam paruh kedua dasawarsa 1970-an. Pemerksaan anak-anak memperlihatkan pola yang serupa dengan pemerksaan perempuan dewasa. Anak-anak perempuan diperksa setelah mereka dan keluarga mereka menyerah; mereka diperksa di markas militer, di rumah, dan di penahanan atau pada saat dibebaskan.

311. Pola pertama yang dapat dicatat pada masa ini adalah jumlah kekerasan seksual yang terjadi di berbagai kamp dan desa tempat dilepaskannya anggota masyarakat yang baru menyerah atau ditangkap. Setelah menyerah atau ditangkap, anak-anak ditempatkan di bawah penguasaan langsung penjaga dan anggota militer lainnya.[‡]

* Berdasarkan angka tahunan kekerasan seksual, koefisien korelasi kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan anak-anak adalah 0,61.

† Bab 7.7: Pemerksaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual mendokumentasikan kasus-kasus yang serupa di kamp: "Ketika kami tiba di Dotik [Alas, Manufahi], tidak ada rumah di situ... Mereka [ABRI] menyuruh masyarakat membangun rumah sendiri. Setelah tinggal di sana selama sebulan, kami tetap berada di bawah penguasaan mereka. Setiap malam mereka akan membuat suatu rencana, mereka berpura-pura memanggil gadis yang mereka suka. Hal yang sama terjadi pada saya. Suatu malam mereka memanggil saya, untuk apa saya tidak tahu. Mereka membawa saya ke suatu tempat yang rumputnya tinggi. Mereka mulai mengancam saya, 'Kalau kamu tidak tunduk, kamu akan mati di sini juga. Kamu melakukannya dengan Falintil, kenapa tidak dengan kita?' Karena diancam mereka, saya lakukan saja apa yang mereka minta." Pernyataan HRVD 07241; lihat juga wawancara CAVR dengan EM, Mau Chiga, 31 Mei 2003 untuk kasus lain penahanan di kamp Dotik; lihat juga Bab 7.7: Pemerksaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-bentuk Lain Kekerasan Seksual, bagian E Studi Kasus: Pemerksaan dan perbudakan seksual di Dotik (Alas, Manufahi).

Eufrasia de Jesus Soares memberitahukan kepada Komisi bahwa ia ditangkap bersama keluarganya oleh Yonif 721 pada 13 Oktober 1979 dan ditempatkan di kamp di Railaco (Ermera). Ia menyebutkan perlakuan terhadap anak-anak perempuan di dalam kamp:

*Mereka memilih perempuan yang mereka anggap cantik, menyuruhnya mandi lalu membawanya untuk satu atau dua minggu dan pada akhirnya membawanya kembali ke keluarganya.*²³³

312. Juga ada kasus-kasus yang dilaporkan mengenai anak-anak perempuan yang dipaksa menjalani perbudakan seksual di kamp pemukiman. Seorang anak perempuan berusia 14 tahun, CM, menyampaikan bahwa pada 1978 ia ditangkap bersama keluarganya dan ditempatkan di satu kamp di Soro (Ainaro). Setelah lima bulan, seorang Babinsa bernama C58 mengancam untuk menembak anak itu, ayahnya, dan kakak laki-lakinya jika ia tidak mau menjadi "istrinya." Dari hubungan ini, ia melahirkan satu anak sebelum laki-laki tersebut meninggalkan Timor-Leste dan ia melanjutkan kegiatan bawahtanahnya.²³⁴

313. Pola kedua pada periode ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak perempuan untuk menghukum anggota keluarganya yang terlibat dalam Fretilin/Falintil: menjadi sasaran pengganti.* Misalnya, Komisi memperoleh beberapa kesaksian dari para mantan TBO tentang pelanggaran seksual yang dilakukan anggota tentara dalam kesatuannya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai satu bentuk penyiksaan psikologis terhadap tahanan. Alfredo Alves, seorang TBO dari 1978-1982, memberikan kesaksian kepada Komisi sebagai berikut:

*Saya melihat sendiri bagaimana tahanan disiksa, anak-anak perempuan dan istri mereka disiksa di depan mereka!...Saya menyaksikan bagaimana mereka memperlakukan perempuan berusia 15 tahun ke atas...Saya melihat bagaimana mereka diperlakukan. Sejak itu, saya benar-benar memahami apa artinya pelanggaran...Sepanjang sore mereka membawa perempuan sesukanya. Ada beberapa hal yang tak bisa saya ungkapkan karena terjadi dengan orang yang dekat dengan saya.*²³⁵

314. Penelitian Komisi mengenai perempuan di Lalerek Mutin (Viqueque, Viqueque) menemukan sejumlah kasus perbudakan seksual terhadap anak-anak pada masa ini. Pada 1978, DM berumur 15 tahun ketika ia dan ibunya menyerah dan tinggal di Beobe (Viqueque). Saudara laki-laki dan ayahnya tetap tinggal di hutan dan DM dicurigai berhubungan dengan mereka. Ia diinterogasi di Kodim selama 10 hari. Setelah dibebaskan, seorang anggota tentara yang bernama C57 mulai datang ke rumahnya. DM berusaha menghindarinya dengan tidur di rumah tetangganya tetapi

* Sebagaimana dijelaskan dalam bab mengenai kekerasan seksual, kekerasan pengganti adalah "kekerasan yang dilakukan karena sasaran utamanya tidak hadir...dengan tujuan untuk menghancurkan/menundukkan musuh." Lihat juga Galuh Wandita, "Sisa dari mati: Violence towards Women and Transitional Justice." Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Surabaya, Surabaya, 2000.

ia kemudian dituduh mencari keluarganya di hutan. Ketika ia sedang bersembunyi di tumpukan jagung di bagian atap rumah adat, C57 menemukannya:

Lalu dia naik ke atas tempat persembunyian saya. Karena takut saya lari turun tetapi saya terjatuh. Saya tidak bisa lari karena kesakitan, ia langsung datang dan menggendong saya masuk ke dalam kamar. Pada saat itu juga kami berdua hidup sebagai suami istri sampai saya mendapatkan seorang anak dari dia. Dia berjanji pada saya akan kembali tiga tahun lagi. Tetapi sampai sekarang dia tidak pernah muncul.²³⁶

315. FM, juga dari Beobe, berumur 14 tahun ketika dicurigai terlibat dalam satu insiden kecil dan menjalani masa perbudakan seksual yang lama. Pada 1978, FM ditangkap atas kecurigaan menutup jalan dan menghalangi kendaraan patroli ABRI. Ia dibawa ke kantor desa Beobe dan diinterogasi oleh Babinsa C58, Wakil Babinsa C59 dan anggota Yonif 330 bernama C60. Ketika interogasi, C60 mulai menelanjangi FM. FM menangis karena sedang datang bulan, tetapi diancam, “Kalau kamu tidak melakukan apa yang kami perintahkan, kami akan memotongmu sekarang.”²³⁷ Ketika laki-laki itu lalu memerkosanya.

316. FM ditahan di kantor desa selama tiga hari dan diperkosa berulang kali oleh tiga laki-laki tadi. Setelah dibebaskan, anggota-anggota Kodim mengambilnya dari rumahnya ke Kodim Viqueque di mana ia disekap dalam kamar selama tiga bulan dan diperkosa berulang kali oleh Komandan Kodim C61, seorang operator radio, dan seorang supir. Sebulan setelah dibebaskan, FM dibawa oleh Komandan Koramil dan dijadikan “istri” selama 18 bulan serta dipaksa memberikan layanan seksual kapan saja sesuai permintaan. Pada akhirnya ia melahirkan seorang bayi darinya.

317. Seperti diperlihatkan kasus di atas, sekali dilanggar, perempuan menjadi rentan terhadap eksploitasi jangka panjang, yang mengarah pada perbudakan seksual yang lama atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual yang berulang.* Pernyataan GM, yang diidentifikasi sebagai anggota Falintil, mengungkapkan penangkapannya pada 1976 ketika berumur 16 tahun di Hato Bullico (Ainaro), oleh kepala desa Mulo dan C63, seorang anggota Koramil:

Komandan kompi, Hansip C64, dan [prajurit] Koramil C63 menginterogasi saya tentang Komandan Hauta-Lafera. Setelah diinterogasi...C65 yang melepaskan rok dalam dan celana dalam saya untuk dibakar, membuat saya telanjang. Baru C65 memerkosanya pertama—membuang saya ke lantai dan membuka paha saya. Saya teriak, menangis tetapi mereka tetap merusak saya.

Kemudian, pada tahun yang sama, Hansip C65 melakukan kekerasan seksual terhadap saya, memaksa saya menjadi istri dengan senjata

* Lihat Pernyataan HRVD 08736 tentang anak perempuan berusia 17 tahun, yang diperiksa pada 28 Maret 1979 oleh Kasi I ABRI, C69, di Lospalos karena ia punya keluarga di hutan. Kemudian ia dipaksa untuk menjadi “istri simpanan” selama dua tahun.

Mauser...dia menelanjangi saya dan kemudian memanggil teman Hansipnya untuk datang dan melihat saya dan mereka tertawa...baru mereka antar saya ke Koramil Maubisse. Dia datang dan melanggar saya sampai saya melahirkan seorang anak.²³⁸

318. Seorang anggota Fretilin yang berumur 14 tahun melaporkan bahwa ia ditahan bersama sepupunya di Letefoho (Ermera) pada 1977. Mereka dibawa ke sebuah kamar, diancam akan dibunuh, dan diperkosa oleh anggota tentara dari Koramil Letefoho. Setelah empat hari ia dibawa ke Kodim Ermera selama satu tahun. Selama masa itu ia diperkosa berulang kali, dilarang bertemu dengan keluarganya, dan dipaksa “menikah” dengan seorang perwira berpangkat letnan satu. Ia melahirkan dua anak dalam dua tahun berikutnya. Ia mengenal dua perempuan lainnya yang menderita nasib yang sama.²³⁹

319. Kadang-kadang pejabat sipil bekerja sama dengan militer dalam menjadikan perempuan sasaran perbudakan seksual, untuk mereka sendiri atau untuk militer. Pada 1979, di Betano (Same, Manufahi), kepala desanya, C67, ingin menikahi tiga perempuan yang aktif dalam Organisasi Kerakyatan Perempuan Timor (Organização Popular da Mulher Timor, OPMT) yang baru saja menyerah. Mereka termasuk HM, berumur 16 tahun.²⁴⁰ HM mengatakan bahwa karena ditolak, kepala desa itu memberikan nama tiga perempuan tersebut kepada Kodim. Mereka ditangkap oleh Kepala Staf Kodim (Kasdim) bernama C68 dan diinterogasi, sementara C67 kemudian memaksa mereka menjadi “selir-selirnya.”²⁴⁰

1980-1989

320. Selain pemaksaan terang-terangan dan ancaman kekerasan yang ditunjukkan kasus-kasus di atas, terdapat juga kasus-kasus perempuan yang terlibat dalam hubungan seksual dengan orang-orang yang berkuasa. Meskipun sebagian kasus tampaknya mendapatkan persetujuan dari anak-anak yang bersangkutan, menurut hukum, persetujuan mereka tidak sah. Oleh karena itu hubungan seksual dengan anak di bawah umur, dengan atau tanpa persetujuan mereka, adalah tindakan ilegal.[†] Mário Carrascalão, mantan Gubernur Timor Timur, mengungkapkan kepada Komisi tentang kesulitan mendatangkan guru laki-laki muda dari Indonesia tanpa pengawasan yang cukup mengenai perilaku mereka:

Ketika pada 1983 dimulai sistem wajib belajar di Timor Timur, tidak hanya anak berusia enam tahun yang mulai mengikuti sekolah, tetapi juga orang muda yang berusia sampai 16, 17 tahun mengikuti sekolah dasar. Sebagian kecil sekolah dasar Timor-Leste guru-gurunya ditunjuk untuk menyeleksi banyak guru Indonesia. Hanya laki-laki, bujangan atau menikah (tapi jika menikah istrinya tetap tinggal di

* Umur korban lainnya tidak disebutkan.

† Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pasal 287. Hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa umur persetujuan adalah 15 tahun.

Indonesia), guru-guru dikirim ke Timor-Leste. Orang Timor yang diseleksi untuk mengajar di sekolah dasar juga, sebagian besar, laki-laki, muda yang baru saja menyelesaikan sekolah mereka dan bujangan atau menikah...Akibat dari situasi ini sampai ke pemerintah dalam bentuk cerita-cerita tentang keterlibatan guru “Bapak” [orang Indonesia] atau orang Timor-Leste dengan murid-murid perempuan mereka. Distrik Covalima, Maliana, Liquiçá, dan Baucau adalah yang mencatat banyak kasus. Di Baucau, seorang guru dari Indonesia memerkosa 22 murid perempuannya. Kasus ini dibawa ke pengadilan dan si pemerkosa diputus hanya dua setengah tahun penjara. Laki-laki ini akhirnya dikirim pulang ke daerah asalnya, tanpa menyelesaikan hukumannya di penjara.²⁴¹

Pengadilan kasus pemerkosaan anak di bawah umur, Pengadilan Dili, 1982

Pada 1982, seorang Hansip bernama C111, berumur 17 tahun, dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Dili karena memerkosa anak perempuan berumur 12 tahun bernama IM. Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan),^{*} C111 menyampaikan kejadiannya sebagai berikut:

Pada 22 Juni 1982 saya bertugas sebagai Hansip di Pasar Mercado Dili dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan surat-surat bagi setiap orang yang datang berkunjung di pasar waktu malam dan bermalam di pasar tersebut. Bahwa pada waktu itu kebetulan saya memeriksa seorang wanita yang bernama IM yang barusan turun dari Baucau, di mana waktu itu saya menanyakan surat jalan, terus ia mengatakan bahwa surat jalannya itu ada pada kakaknya yang bermalam di Bekora. Oleh karena itu saya pada malam itu juga menahan IM di pos induk Pasar Mercado di mana saya bertugas. Bahwa kemudian pada jam 4 pagi saya lalu menanyakan lagi kepada IM di mana surat jalannya dan iapun tetap menjawab bahwa surat jalannya itu ada pada kakaknya yang tidur di Bekora. Pada waktu itu timbul niat saya untuk melakukan persetubuhan dengan IM oleh karena waktu itu hanya kami berdua sendiri sedangkan semua orang masih tidur. Kemudian saya membawa IM ke pos polisi untuk

^{*} Berkas Pengadilan No: 17/PID.S.B/1982/PN.DIL, Hakim: Doris A.A. Taulo, SH, Panitera: Petrus Lamapaha, Penuntut: M. Darwin, Putusan: 19 November 1982. CAVR belum melakukan penelitian yang menyeluruh atas semua berkas dalam Koleksi Pengadilan Negeri Dili dan tidak dapat mengatakan apakah kasus ini biasa atau luarbiasa. Namun Komisi mengamati dari berkas-berkas pengadilan bahwa kekerasan seksual adalah kasus yang sering ditangani pengadilan ini.

menakutkan dia, agar supaya niat saya untuk bersetubuh dengan IM bisa tercapai. Bahwa ketika kami sampai di belakang Pasar Mercado saya dengan paksa memerintahkan IM untuk duduk di rumput, akan tetapi ia tidak mau dan akhirnya saya memukulnya sebanyak dua kali pada badannya sehingga IM takut, lalu tidur di atas rumput-rumput.

C111 melanjutkan dengan menggambarkan pemerkosaan tersebut dan bagaimana ia kemudian membebaskannya untuk kembali ke rumah. Akan tetapi IM segera melaporkan insiden ini kepada Komandan Hansip. Keesokan harinya, C111 ditangkap oleh seorang anggota Hansip lainnya dan dibawa ke kepolisian. C111 segera mengakui tentang kejahatan ini dan ditahan oleh kepolisian. Dalam persidangannya pada November 1982 itu, C111 dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan pemerkosaan dan dihukum kurungan penjara 1 tahun dan 6 bulan. Hukuman dijatuhkan atas dasar pengakuannya dan pernyataan tertulis dari korban, dua saksi, dan seorang dokter yang memeriksa korban dan menyatakan selaput darahnya telah koyak. Baik korban maupun para saksi tidak ada yang menghadiri sidang. Putusan pengadilan menyebutkan bahwa selaput dara perempuan tersebut telah robek, tetapi tidak menyebutkan fakta bahwa korban adalah anak di bawah umur. Pengadilan menyatakan bahwa tindakan C111 menyalahgunakan wewenang merupakan hal yang memberatkan hukumannya.

321. JM melaporkan kepada Komisi bahwa pada 1982, di Mau Chiga (Hato Bulico, Ainaro) ketika itu ia berumur 14 tahun, seorang anggota Yonif 744 membawanya secara paksa dari rumahnya ke satu ladang kosong dan memerkosanya. JM menyatakan bahwa ia mengetahui adanya lima perempuan lainnya yang mengalami nasib yang sama. Pemerkosaan terjadi setiap malam dalam satu pekan.²⁴²

322. Dalam satu kasus lain, KM memberikan pernyataan yang mengungkapkan bahwa pada 1982, ia adalah murid kelas dua yang berumur 10 tahun di Ossowalu (Vemasse, Baucau). Suatu hari dua anggota Yonif 328 datang ke rumahnya. Salah satu dari mereka bernama C70. KM mengingat, “Dia memegang tangan saya dan berkata, ‘Mau melakukannya dengan saya?’ Saya menjawab, ‘Saya terlalu muda.’” Tetapi ia menarik KM, menelanjinginya, dan memerkosanya. Alat kelamin KM berdarah akibat penetrasi yang kasar. Keesokan harinya orangtua KM kembali dari kebun mereka dan terkejut mendengar apa yang telah terjadi. Selama tiga hari berikutnya anggota TNI dari Yonif 328 datang ke rumah mereka dan menuduh mereka menyembunyikan anggota Fretilin. KM diperkosa berulang kali sampai akhirnya menjadi hamil.²⁴³

323. Kasus LM juga mengemukakan kerentanan anak-anak sekolah, serta keterlibatan pejabat pemerintah sipil yang membolehkan militer melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap anak-anak. LM mengungkapkan kepada Komisi bahwa ketika

ia berumur 13, pada September 1983, anggota Kodim 1630 Viqueque datang ke kelasnya dan mengambil beberapa teman perempuannya tanpa penjelasan. Ketika LM pulang setelah mengantar makanan untuk bibinya, yang ditahan di Viqueque, ia bertemu dengan kepala desa Waimori (Viqueque), C71. Kepala desa itu menyuruh LM datang ke rumahnya di Beobe (Viqueque) keesokan harinya dan agar membawa serta teman sekelasnya NM:

Langsung pada malam itu saya harus melayani Dandim C72, NM melayani Danramil C73, dan OM melayani Babinsa Kraras yaitu C74. Setiap malam saya dijemput dan dibawa ke Kodim untuk melayani mereka dan lalu pagi hari saya pulang ke rumah, sedangkan OM dan NM tak pernah pulang ke rumah dari Kodim. Ini berlangsung selama tiga bulan sampai OM dan NM hamil dan mereka berdua menjalani aborsi.

Setelah tiga bulan, Dandim itu dilantik sebagai Bupati Viqueque dan membawa istrinya dari Jawa ke Viqueque. Sejak itu saya tidak pernah melayani Dandim lagi. Untung saya tidak hamil...tiap malam mereka menjemput dan membawa ke Kodim. Beberapa teman sekolah melihat kami dan saya malu sekali. Akhirnya saya meninggalkan sekolah.²⁴⁴

324. Pola penargetan anggota klandestin oleh militer Indonesia dalam kasus pelanggaran seksual berlanjut pada dasawarsa 1980-an. Tidak ada perbedaan antara anggota klandestin perempuan yang dewasa dan yang anak-anak. Seorang narasumber mengatakan kepada Komisi bahwa seorang anak perempuan berumur 12 tahun disekap selama tiga bulan pada 1980 di markas Komando Pasukan Khusus di Farol, Dili. Ia menjadi sasaran perbudakan seksual oleh para anggota pasukan khusus itu secara bergiliran. Ini terjadi karena rumah korban diketahui sebagai titik informasi klandestin.²⁴⁵

325. PM berumur 17 tahun pada 1980, ketika ABRI mengambilnya bersama suaminya dari rumah mereka di Desa Macadiqui (Uatolari, Viqueque) ke Koramil Uatolari. PM sudah terlibat dalam kegiatan klandestin seperti menyediakan makanan untuk Falintil. Di Koramil, ia ditelanjangi dan bajunya dikencingi. Kemudian tiga orang anggota Hansip, C75, C76, dan C77, memerkosanya di depan suaminya. Meskipun masa penahanannya tidak jelas, PM mengatakan bahwa anggota-anggota Hansip memerkosanya tiap malam.²⁴⁶ QM, seorang perempuan berusia 17 tahun, dari Dare, Mau Chiga (Hato Builico, Ainaro), menolong anggota Falintil yang terluka pada Agustus 1982. Akibatnya ia dibawa tentara ke Koramil Dare dan diserahkan kepada kesatuan ABRI yang beroperasi di Gunung Kablaki. Mereka memerkosanya tiap hari sampai ia melarikan diri pada Oktober tahun itu.²⁴⁷

326. RM melaporkan bahwa ketika berumur 12 tahun, ia ditangkap pada 1980, bersama ayahnya RM1, di Suhurama, Dili oleh dua orang anggota pasukan khusus. Mereka dibawa ke Mandarin, satu tempat penahanan di Dili, di mana para prajurit pasukan khusus, dibantu oleh seorang penerjemah bernama C78, menginterogasi mereka. Selama interogasi RM disundut dengan rokok pada wajah dan tangannya

dan mereka membakar rambutnya dengan korek gas sampai akhirnya hangus. RM disekap di WC. Ia dibawa kembali ke ruang duduk di mana ia menyaksikan bapak dan pamannya, RM2, ditelanjangi, disetrum, dan dipukul dengan sebatang besi. Ia juga melihat beberapa perempuan diperkosa oleh anggota-anggota Komando Pasukan Khusus. Setelah tiga minggu di Mandarin, RM dan bapaknya dipindahkan ke penjara Balide. Ketika akhirnya dilepaskan, RM diperkosa oleh anggota-anggota Komando Pasukan Khusus di Pantai Kelapa, Dili. Ia dilepaskan dengan syarat wajib lapor kepada militer selama satu tahun.²⁴⁸

327. Pada satu insiden lain, Komisi menerima informasi bahwa 19 anggota klandestin berasal dari sekitar Viqueque ditangkap Kopassus pada Mei 1986 dan dibawa ke markas Kopassus di Baucau di mana mereka disiksa dan diinterogasi tentang kegiatan mereka. Salah satu anggota dari kelompok itu, Caetano Alves, memaparkan apa yang dilihatnya terjadi pada empat perempuan muda anggota klandestin: SM (14 tahun), TM (16 tahun), UM (10 tahun), dan VM (16 tahun):

Saya berdiri di luar dan melihat lewat jendela kaca ternyata teman-teman saya juga diperlakukan sama dengan yang saya alami: tak terkecuali teman-teman wanita juga mereka telanjangi dan disetrum di buahdada dan kemaluannya. Bahkan beberapa orang wanita mereka bakar dengan puntung rokok di tubuh dan kemaluannya. Selain penganiayaan-penganiayaan tersebut teman-teman wanita juga mengalami pelecehan seksual seperti dihina dengan kata-kata kotor serta diajak untuk bersetubuh dengan mereka. Setiap hari selama lima hari kami tetap diinterogasi dan disiksa seperti itu.²⁴⁹

328. Pada awal dasawarsa 1980-an, terjadi penumpasan besar-besaran oleh militer di berbagai daerah tempat pemberontakan Falintil terjadi. Kekerasan seksual, termasuk terhadap anak-anak, merupakan bagian dari strategi penumpasan ini. WM lahir pada 1966 dan berusia sembilan tahun ketika ia melarikan diri ke Gunung Kablaki bersama keluarganya. Meskipun keluarganya kemudian menyerah di Ainaro, mereka terus membantu para pejuang Falintil. Pada 1982, setelah *levantamento* di Dare, Mau Chiga (Hato Builico, Ainaro), WM ditangkap dan disiksa. Ia lolos dari maut hanya karena seseorang menyarankan untuk menggunakannya sebagai pelayan dapur dan budak seks. WM berumur 17 tahun pada waktu itu:

[Para prajurit] berkata, "Wakil Danramil adalah orang jahat, lebih baik membawa dia dan membunuhnya di Maumeta-Kio di tengah Kali, daripada membiarkannya hidup." Tetapi banyak yang tidak setuju dan lebih suka kami tinggal di Koramil dan bekerja di dapur mereka. Lalu, setiap malam kami dijemput...mereka mengatakan atas permintaan Komandan Kodim...Sadar akan status kami sebagai tahanan perempuan, kami hanya tunduk dengan putus asa. Ini berjalan secara rutin, lalu setiap dua atau tiga hari kami dijemput pada larut malam.²⁵⁰

329. Seperti banyak korban kekerasan seksual lainnya, WM menjadi hamil karena orang yang menangkapnya. Ia mempunyai anak dari seorang anggota ABRI bernama C79.

330. Sesudah pemberontakan Mau Chiga, sejumlah perempuan muda dari wilayah itu ditahan dan dipaksa “menikah” dengan anggota tentara. XM, berusia 15 tahun, ditahan di Kodim Ainaro dan berulang kali diperkosa oleh petugas-petugas intelijen yang bertugas di sana: Kasi I C80, Sersan Kepala C81 dan Sersan Satu C82. XM selanjutnya dipindahkan ke Koramil Dare dan dipaksa tinggal di rumah Sersan Satu C83 sampai ia pulang pada 1999.

1990-1998

331. Jumlah insiden kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur menurun pada masa ini, mungkin ketika kehidupan masyarakat menjadi lebih normal dan kesempatan bagi tindakan acak pemerkosaan dan penganiayaan seksual berkurang. Dari berbagai pernyataan dan penelitian Komisi, hanya satu kasus dari masa ini berhubungan dengan anak-anak, walaupun lagi-lagi harus dicatat bahwa 33,9% (289/853) kasus tidak ada data mengenai usia korban.

332. Insiden yang dilaporkan kepada Komisi menunjukkan bahwa pemerkosaan masih digunakan untuk menghukum perempuan muda anggota jaringan klandestin. YM berumur 15 tahun pada 1993 dan tinggal di Malabe (Atsabe, Ermera). Ia melaporkan bahwa dirinya tertangkap dengan dua perempuan lainnya ketika sedang kembali dari pertemuan dengan Falintil, kemudian ditahan dan diperkosa di Polsek Atsabe oleh seorang polisi bernama C84 (sekarang bertugas dalam Kepolisian Nasional Timor-Leste, PNTL).²⁵¹

1999

333. Pada 1999, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Komisi terjadi dalam kekacauan dan kekerasan setelah pemungutan suara Jajak Pendapat. Desa-desa dibakar dan anak-anak dipisahkan dari keluarga mereka pada saat terjadi pemindahan paksa penduduk ke Timor Barat. Ini membuat anak-anak menjadi rentan terhadap kekerasan dan penganiayaan.

334. Mungkin kasus yang paling terkenal adalah kisah ZM yang dibawa oleh seorang anggota milisi ke Timor Barat ketika berumur 15 tahun dan sampai hari ini belum kembali ke rumahnya.

ZM (sebagaimana diceritakan oleh bibinya, ZM1, pada November 1999)

Ayah ZM sudah lebih dulu mencari perlindungan di hutan setelah pemungutan suara. ZM dan adik laki-lakinya ZM2 [13 tahun] harus lari ke gereja di Suai [Covalima] bersama saya, bibinya, ZM1, bersama Pastor Hilário pada 5 September 1999. Keesokan harinya 6 September 1999 sekitar pukul 14.45, gereja diserang oleh kelompok milisi Mahidi, kelompok milisi Laksaur, dan TNI dan para pejabat pemerintah... Saat itu juga, berbagai kekerasan dilakukan seperti penembakan secara membabituta, pengeboman, penyiksaan, dan pembakaran. ZM melihat adiknya, ZM2 dibunuh dalam penyerangan itu.

Pengungsi dipaksa meninggalkan gereja. Kami pengungsi dibagi dalam dua kelompok, yaitu ada yang ke Kodim dan ada yang ke gedung SMP 2 Suai. Kami berada di Kodim selama satu minggu dari tanggal 6 sampai tanggal 12 September 1999. Pada saat di Kodim, di depan saya sendiri dan di depan Bupati Herman dan anggota Laksaur bernama C86 mengambil ZM. Ia mengatakan, "Ini sebagai hadiah perang untuk saya." Mulai saat itu ZM dipisahkan dari keluarganya dan dibawa ke mana saja C86 pergi melakukan kegiatannya.

ZM dibawa tinggal di markas Laksaur di Raihenek Betun (Suai, Covalima) bersama dua orang istri C86. ZM selalu dijaga ketat oleh Laksaur ke manapun dia pergi, ke kamar mandi untuk buang air kecil pun dijaga. ZM tidur sekamar dengan istri C86 yang lain, posisi tempat tidur diapit oleh kedua istri C86. Pada saat pertama saya bertemu dengan ZM86, dia hanya menangis tidak dapat bercerita banyak karena diawasi dan dijaga ketat. ZM pernah masuk rumah sakit dan diinfus karena kondisinya sangat lemah...Saat itu saya diizinkan masuk untuk bertemu dengan ZM tetapi dengan pengawasan para milisi Laksaur.

ZM sekarang dalam keadaan hamil dua bulan [November 1999]. Ia masih di tangan Laksaur, khususnya C86. Keluarganya menginginkan dia kembali, tetapi mereka takut nasibnya.²⁵²

Saat ini ZM masih bersama C86 di Timor Barat, Indonesia.

335. Setelah pembantaian di Gereja Suai, perempuan dan anak-anak dari Suai ditahan di gedung sekolah menengah pertama. AN berusia 17 tahun pada waktu itu. Ia ingat bahwa setiap malam para perempuan dibawa keluar satu-satu. Ia mengisahkan tentang gilirannya:

Pada 11 September 1999...milisi Laksaur datang dengan memegang senter sambil mengarahkan senter ke depan muka saya dan membuka kain sarung yang saya pakai...Milisi Laksaur menyuruh saya bangun dan mengancam kalau tidak...mereka akan menembak orang-orang yang berada di sekitar saya. Saya terpaksa bangun dan mereka menarik saya keluar dari ruang dan dibawa pergi oleh milisi Laksaur bernama C87. Saya diperkosa, setelah itu dipulangkan ke ruang semula. Di ruang tersebut saya hanya menangis.²⁵³

336. Sesudah ini, para perempuan dibawa ke gedung yang lain. AN diperkosa lagi pada 14 September, kali ini oleh seorang polisi yang juga anggota intelijen Indonesia.

337. Beberapa kasus dari Distrik Aileu juga memberikan petunjuk mengenai kejadian pada waktu itu. Pada September 1999, BN berumur 14 tahun ketika ia dipindahkan dari rumahnya di Liquidoe (Aileu) ke Kota Aileu dalam persiapan melarikan diri ke Atambua. Ia dan kakak perempuannya tinggal di gedung Puskesmas. BN dipanggil ke rumah camat dan dalam perjalanan diperkosa oleh C88, seorang anggota milisi AHI (Aileu Hametin Integrasi) dan kemudian oleh seorang anggota Brigade Mobil (Brimob) Polri. Ia mengisahkan:

Tetapi di tengah jalan, saya dipaksa oleh C88 ke sebuah rumah kosong yang di dekat lapangan sepak bola Aileu. Tiba di sana, saya ditodong pisau bahwa harus menyerahkan diri untuk diperkosa. Karena saya takut, saya menyerah untuk diperkosa oleh C88. Lalu pada malam berikutnya, saya dibawa pergi lagi oleh tiga orang anggota Brimob [identitas tidak diketahui] ke sebuah rumah kosong dekat Puskesmas Aileu kota, lalu saya diperkosa oleh seorang anggota Brimob, sedangkan dua orang lainnya tidak ikut memerkosa saya tetapi berjaga-jaga di pintu dengan senjata.²⁵⁴

338. Pada 1 September 1999, CN, seorang anak perempuan berumur 12 tahun, menghadiri latihan tari tradisional untuk kampanye CNRT di desanya, Namleso (Lequidoe, Aileu). Tanggal 9 September, milisi AHI datang dan membakar rumah-rumah di desanya. Keesokan harinya mereka kembali dan mulai menembak dan CN bersama keluarganya melarikan diri. Ketika mereka mencapai jalan utama, anggota milisi C89 mendekatinya, menampar mukanya, meremas buahdada, dan pantatnya serta mengancam membunuhnya dengan senapan.

339. Juga di Aileu, pada 4 September 1999, DN bersama ibunya melarikan diri ke kota Aileu karena mereka mendengar bahwa desa mereka, Seloi Kraik, akan dibakar. DN yang pada waktu itu berumur 17 tahun tinggal dengan pamannya di Aileu. Setelah beberapa hari seanggota milisi, C90, mengancam ibunya untuk memberikan DN padanya. C90 membawa DN selama satu minggu, memerkosanya pada malam hari. Ketika berusaha untuk melarikan diri, ia diancam akan dibunuh. Tanggal 14 September C90 membawa DN ke Dili dan kemudian DN pergi dengan keluarga C90 ke Atambua. DN hidup dengan keluarga C90 di Atambua selama dua minggu

sampai istrinya menjadi curiga dan DN mengakui bahwa ia telah diambil sebagai istri kedua. DN diusir dari rumah itu dan akhirnya berhasil kembali pulang.²⁵⁵

340. EN mempunyai kisah serupa dari Ainaro. Ia mengungkapkan bagaimana pada 23 September 1999, ketika ia masih berumur sembilan tahun, milisi Mahidi datang dan membakar desanya dan memaksa penduduk berjalan dengan mereka menuju Atambua. EN berjalan dengan ibunya tetapi ibunya tertinggal jauh di belakang dan ditembak oleh C91, seorang anggota Mahidi dan kerabat dari ayahnya.

341. Sewaktu mereka sampai di Betun (Timor Barat), C91 mengambil EN untuk tinggal dengannya dan istrinya. Ia ditempatkan di sebuah kamar tanpa pintu selama satu minggu dan C91 memerkosanya tiap malam. Ia memaparkan:

Pada malam hari C91 menggunakan kesempatan di saat istrinya sedang tidur untuk masuk ke kamar saya, saat itu saya ingin berteriak tetapi C91 menutup mulut saya. Setelah itu C91 juga memaksa dan melepaskan pakaian saya dan C91 tidur di atas saya. Saat itu badan saya tidak ditutupi oleh satu benang pun. C91 mencium saya dan memerkosa saya sebanyak tiga kali. Tidak lama karena C91 takut akan ketahuan oleh istrinya.²⁵⁶

342. Setelah satu minggu, EN diambil oleh pamannya, seorang anggota TNI.

Pemindahan anak-anak ke Indonesia

343. Dari tahun-tahun awal pendudukan sampai saat kedatangan pasukan penjaga perdamaian pada September 1999, beberapa ribu anak Timor-Leste telah dibawa atau dipindahkan ke Indonesia. Walaupun sebagian dari anak-anak ini tetap berhubungan dengan keluarga mereka dan pada akhirnya dapat kembali, sebagian lainnya tidak pernah kembali ke Timor-Leste dan nasib atau keberadaan mereka tidak pernah diketahui oleh keluarga mereka.

344. Dalam tahun-tahun awal setelah invasi, sebagian besar kasus anak-anak yang dibawa ke Indonesia melibatkan prajurit perorangan yang membawa anak tersebut karena ada kesempatan, biasanya tanpa persetujuan dari keluarga atau pihak lain. Dengan berjalannya waktu, praktik memindahkan anak-anak menjadi diatur secara resmi. Tetapi pada praktiknya anak-anak terus diculik atau persetujuan orangtua banyak didapatkan melalui pemaksaan, baik secara terang-terangan atau terselubung.

345. Pejabat-pejabat pemerintah, dan kemudian departemen-departemen pemerintah, juga terlibat dalam pemindahan anak-anak. Sejak akhir dasawarsa 1980-an, peran lembaga-lembaga keagamaan terus meningkat dalam praktik ini. Mereka mengirimkan anak-anak Timor-Leste ke berbagai lembaga di Indonesia

untuk tinggal dan belajar, dalam sebagian kasus tanpa restu dari keluarga mereka atau tanpa memberikan cara bagi keluarga untuk tetap berhubungan dengan anak-anak mereka.

346. Setelah Jajak Pendapat 1999, terjadi gelombang pemindahan baru yang didorong oleh pemindahan ribuan keluarga dan upaya kaum prointegrasi untuk meneruskan perjuangan bagi masa depan Timor-Leste dengan cara lain. Sebagian besar anak-anak dipindahkan dari kamp-kamp di Timor Barat, kebanyakan dengan izin dari orangtua atau penanggungjawab yang menginginkan tempat yang lebih aman bagi anak-anak yang mereka asuh. Namun sebagian orangtua yang menyetujui pemindahan sementara anak-anak ini belakangan mengalami kesulitan untuk membawa mereka kembali pulang atau bahkan untuk menghubunginya.

347. Menulis tentang periode 1999, Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) mencatat bahwa:

...konflik mengenai kemerdekaan Timor-Leste sampai tingkat tertentu diproyeksikan pada, dan dijalankan melalui, upaya-upaya menguasai anak-anak.²⁵⁷

348. Pernyataan ini berlaku juga untuk keseluruhan masa pendudukan. Praktik umum pengambilan anak-anak memperlihatkan satu pandangan bahwa dengan menguasai wilayah Timor-Leste, Indonesia juga memiliki kekuasaan tak terbatas atas anak-anak. Ini terwujud selama masa kekuasaan rezim Orde Baru. Anggota-anggota ABRI dan orang-orang lain yang berkuasa di Timor-Leste merasa bahwa mereka berhak mengambil anak Timor-Leste tanpa izin orangtuanya.

349. Juga ada peragaan di muka umum anak-anak Timor-Leste di Istana Presiden di Jakarta pada 1977 (lihat bagian berjudul “Pemindahan oleh pejabat pemerintah dan organisasi amal”, paragraf 375 – 377 di bawah ini). Praktik ini, khususnya ketika hal ini menjadi semakin terlembaga di masa pendudukan, sering dihubungkan dengan pencapaian tujuan politik, agama, atau ideologi yang lebih luas. Badan-badan militer, pemerintah, dan keagamaan sering bertindak bersama-sama.

350. Standar internasional mengatur bagaimana anak-anak, khususnya anak-anak yang tidak dirawat keluarga, harus diperlakukan oleh negara, dalam situasi konflik maupun pada masa damai. Menurut Konvensi Jenewa IV, Indonesia sebagai Kekuasaan Pendudukan memiliki tanggung jawab pada anak-anak Timor-Leste selama periode mandat. Indonesia wajib:

- mengungsikan anak-anak dari medan perang (Pasal 17)
- memastikan bahwa anggota keluarga yang sama tidak dipisahkan (Pasal 49);
- memastikan bahwa anak-anak berusia di bawah 15 tahun yang terpisahkan dari keluarga atau kehilangan orangtua, tidak boleh dibiarkan tanpa ada yang mengasuh (Pasal 24)
- menjamin anak-anak dipersatukan kembali dengan orangtua mereka atau menempatkan mereka dengan keluarga atau teman (anak-anak hanya boleh ditempatkan di lembaga sebagai pilihan terakhir);

- memastikan semua langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi anak-anak dan mencatat nama orangtua mereka (Pasal 50) (negara tidak dapat mengubah status pribadi seorang anak); dan
- memastikan agar pendidikan disediakan, sedapat mungkin, oleh orang-orang dengan kebangsaan, bahasa, dan agama yang sama (Pasal 50).

351. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak pada September 1990 dan sebagai kekuasaan negara yang efektif di Timor-Leste, Indonesia mendapatkan kewajiban untuk memberikan prioritas pada kepentingan terbaik anak-anak ketika membuat keputusan yang berhubungan dengan anak-anak. Ini berarti bahwa di masa pendudukan Indonesia diwajibkan:

- menjamin, jika dimungkinkan keadaan, bahwa pandangan anak-anak menjadi pertimbangan (Pasal 3[1]);
- mengatur proses adopsi dan memastikan bahwa adopsi dilakukan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku (Pasal 21);
- memerangi pemindahan gelap anak-anak ke luar negeri (Pasal 11);
- memerangi penculikan, penjualan, atau perdagangan anak-anak (Pasal 35);
- menjamin bahwa anak-anak harus selalu bebas untuk memilih agama atau kepercayaan lain (Pasal 30);
- menjamin bahwa jika seorang anak dipisahkan dari keluarganya, negara memberikan pengasuhan yang mempertimbangkan latar belakang budaya anak tersebut (Pasal 20); dan
- melindungi anak-anak dari eksploitasi jenis apapun (Pasal 36).

352. Tidak seperti bagian lain dalam bab ini, pemindahan anak dari Timor-Leste ke Indonesia tidak menjadi bahan penelitian atau analisis statistik. Tetapi, temuan-temuan Komisi diambil dari banyak sekali bukti yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan Komisi dan peneliti-peneliti independen, baik di Timor-Leste maupun di Indonesia, serta sumber-sumber sekunder. Komisi tidak menerima informasi tentang anak-anak yang dikirimkan secara paksa ke negara lain selain Indonesia, tetapi Komisi juga tidak melakukan penelitian khusus tentang hal tersebut.

Jumlah anak-anak yang dipindahkan ke Indonesia

353. Karena pemindahan anak-anak dari Timor-Leste ke Indonesia hampir seluruhnya tidak diatur selama masa pendudukan dan dijalankan melalui bermacam-macam cara, mustahil untuk menentukan dengan tepat jumlah anak-anak yang dipindahkan. Namun perkiraan dapat dibuat dari berbagai keping informasi. Palang Merah Internasional menyampaikan kepada Komisi bahwa mereka telah menerima lebih daripada 4.000 laporan tentang orang-orang yang hilang selama periode ini, sebagian besar dari akhir dasawarsa 1970-an dan dasawarsa 1980-an. Ratusan dari mereka adalah anak-anak di bawah umur pada saat hilang dan termasuk anak-anak yang diambil tentara setelah bertugas sebagai TBO.²⁵⁸ Mario Carrascalão juga

mengatakan kepada Komisi bahwa selama 10 tahun bertugas sebagai Gubernur Timor Timur antara 1982 dan 1992, ia menerima laporan hilangnya 20-30 anak setiap tahun.²⁵⁹

354. Angka tertinggi yang pernah disebut datang dari seorang pensiunan perwira yang bertugas di Timor-Leste kurang lebih satu dasawarsa pada akhir dasawarsa 1970-an dan awal dasawarsa 1980-an, sebagai staf Jenderal Benny Moerdani. Ia mengatakan bahwa para prajurit membawa ribuan anak dari Timor-Leste. Perkiraannya tidak termasuk anak-anak yang dikirimkan oleh berbagai lembaga keagamaan atau lembaga amal pada periode tersebut.²⁶⁰

355. Jika anak-anak yang dipindahkan pada 1999 dimasukkan dalam hitungan, angka perkiraan seluruh anak yang dibawa ke Indonesia meningkat, tetapi angka yang disebutkan sangat berbeda-beda. Satu penelitian yang dilakukan bersama oleh International Refugee Council (IRC) dan UNHCR dengan Dewan Solidaritas Mahasiswa pada akhir 2001, setelah banyak pengungsi sudah pulang, memperkirakan bahwa seluruhnya 2.400 anak telah dipindahkan ke Indonesia selama masa pendudukan. Seorang perwakilan UNHCR mengatakan pada satu audiensi publik bahwa antara 1976 dan 1999 kemungkinan ada 4.534 anak yang telah dipindahkan dari Timor-Leste.*

356. Berdasarkan perkiraan ini, Komisi yakin bahwa beberapa ribu anak telah dikirimkan ke Indonesia dari Timor-Leste. Namun, penting untuk diakui bahwa pemindahan terjadi dengan berbagai cara, mulai dari pemindahan anak-anak yang tidak teregulasi tanpa meminta persetujuan, pemaksaan terhadap anak-anak dan orangtua, sampai dengan pemindahan yang meminta persetujuan mereka.

357. Seperti halnya jumlah keseluruhan, jumlah kasus yang tidak terselesaikan juga sulit ditentukan karena lembaga yang berbeda menggunakan kriteria yang berbeda dalam memutuskan tetap dibukanya sebuah kasus. Satu lokakarya oleh UNHCR yang diadakan di Dili pada Mei 2003, mengidentifikasi 770 kasus belum selesai dari seluruh masa pendudukan.† Menurut UNHCR, sampai 29 Februari 2004, masih ada 221 anak di Indonesia yang terpisah dari orangtuanya di Timor-Leste, berkurang dari 600 pada Juni 2003.²⁶¹ Pada saat penutupan program penyatuan kembali UNHCR pada 31 Desember 2004, masih ada 107 kasus yang ditangguhkan; 72 anak masih berada di Indonesia (Jawa dan Sulawesi), dan 27 anak tidak diketahui keberadaannya.²⁶² Namun demikian, mandat UNHCR hanya terbatas pada pemisahan tahun 1999, tidak termasuk kasus-kasus di mana baik orangtua

* Kesaksian UNHCR pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, 29-30 Maret 2004. Angka-angka itu menunjukkan jumlah kasus yang didaftarkan pada UNHCR. Dari 1999 sampai 31 Desember 2004, 2.365 anak berkumpul kembali dengan keluarga atau pengasuh mereka dan 2.062 kasus ditutup karena perpindahan tanggung jawab atas anak-anak itu. 107 kasus ditangguhkan. Wawancara CAVR dengan Manuel Carceres, UNHCR, Dili, 28 Maret 2005.

† United Nations High Commissioner For Refugees, Evaluation And Policy Analysis Unit, *Evaluation on UNHCR's repatriation dan reintegration programme in East Timor, 1999-2003*, dipersiapkan oleh Chris Dolan, Judith Lange, Naoko Obi, UNHCR, Jenewa, 24 Februari 2004, halaman 61; perinciannya adalah 508 anak laki-laki dan 262 perempuan, dengan 29 orang berusia 0-5 tahun, 262 orang berusia 6-12 tahun, 228 orang berusia 13-15 tahun, dan 251 orang berusia 16-18 tahun.

dan anak-anaknya berada di Indonesia, dan menganggap suatu kasus ditutup ketika anak itu telah memasuki usia 18 tahun. Oleh karena itu, jumlah anak-anak yang dipindahkan dan yang belum kembali sudah pasti jauh lebih banyak.

Pola selama periode mandat

1976-1979

358. Sebagian besar kasus anak-anak yang dipindahkan keluar Timor-Leste ke Indonesia terjadi pada periode antara 1976 dan 1979. Ini adalah periode kekacauan besar-besaran bagi keluarga dan kehidupan komunitas orang Timor-Leste yang timbul akibat dari invasi Indonesia dan operasi-operasi militer selanjutnya. Suasana kacau, pemaksaan, dan impunitas yang berlangsung, serta tingginya jumlah anak-anak yang kehilangan orangtua atau yang terpisah dari anggota keluarga, menciptakan kondisi bagi berlangsungnya pemindahan yang meluas.

359. Dua pola muncul dalam penelitian Komisi mengenai periode ini. Yang pertama adalah personel militer tingkat rendah sampai menengah membawa anak-anak yang ditemukan sendirian di medan pertempuran atau mengambil anak-anak langsung dari keluarga mereka. Sebagian besar kasus seperti ini yang dilaporkan kepada Komisi terjadi tanpa persetujuan orangtua atau yang lain. Pola kedua adalah anak-anak dipindahkan ke Indonesia oleh pejabat-pejabat pemerintah atau lembaga amal terkemuka. Pola-pola ini menimbulkan masalah yang berbeda mengenai persetujuan dan tanggung jawab negara, yang akan dibahas secara terpisah di bawah ini.

Anak-anak dibawa oleh anggota tentara perorangan

360. Komisi telah menerima laporan langsung dari orangtua dan anak-anak dan dari para anggota militer, mengenai anak-anak yang diambil dari Timor-Leste oleh anggota tentara secara perorangan. Seperti yang dikutip di atas, seorang pensiunan perwira dalam militer Indonesia memperkirakan bahwa ribuan anak diambil dengan cara ini. Mayoritas kasus ini melibatkan anggota-anggota tentara yang berpangkat rendah yang membawa anak-anak ketika mereka pulang. Seorang laki-laki, yang pergi secara sukarela dengan kapal militer pada 1976 ketika berumur 18 tahun, mengingat bahwa ia melihat sejumlah anak di atas kapal:

Pada saat itu ada 21 anak di atas kapal. Mungkin ada dua anak yang situasinya baik seperti saya. Ada beberapa yang bekerja untuk perusahaan itu. Ada juga yang mungkin sudah ditelantarkan... sebagian tidak memiliki orangtua maka dari itu mereka dibawa. Mungkin beberapa dari mereka [tentara] tidak mempunyai anak.²⁶³

361. Anak-anak yang dibawa dengan cara ini biasanya ditemukan di medan pertempuran setelah orangtua mereka terbunuh atau terpisah dari keluarga mereka. Komisi mendengarkan kesaksian dari para pegawai dua lembaga yang kadang menjadi tempat para prajurit menitipkan anak-anak ini menunggu

kepeluangannya. Menurut seorang lelaki yang bekerja di Rumah Sakit Wirahusada, rumah sakit militer di Dili, pada 1976 anggota-anggota militer membawa banyak anak kecil dari luar Dili untuk dirawat di rumah sakit. Anak-anak itu biasanya sangat lemah dan berat badannya di bawah rata-rata dan banyak yang meninggal dunia. Para prajurit yang sama sering membawa mereka yang selamat ke Indonesia ketika masa tugasnya selesai. Jika mereka bisa, pegawai orang Timor-Leste membawa anak-anak itu pulang dari rumah sakit, agar para prajurit tidak membawa mereka.²⁶⁴

362. Para tentara juga menempatkan anak-anak dalam pengasuhan Panti Asuhan Seroja di Dili.

Panti Asuhan Seroja

Panti Asuhan Seroja didirikan kembali oleh tentara dari Kodam VIII Brawijaya di bekas panti asuhan di Bairro Formosa, Dili, pada 1 April 1976, tidak lama setelah invasi Indonesia.

Pada saat pembukaannya ada 26 anak di panti asuhan tersebut, tetapi angka itu bertambah dengan pesat. Prajurit-prajurit memasukkan anak-anak dari wilayah-wilayah tempur.^{*}

Menurut Guilherme dos Reis Fernandes, yang selama bertahun-tahun bekerja di Panti Asuhan Seroja dan menjadi kepalanya dari 1980 sampai 1990, lembaga ini tidak hanya menerima anak yatim-piatu tetapi juga anak-anak yang kehilangan salah satu orangtuanya, yang orangtuanya di hutan, atau yang orangtuanya tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Ia juga mengingat:

Banyak anak-anak yang dibawa dari distrik-distrik tanpa penjelasan dan sering ada orangtua yang datang mencari anaknya dan membawa mereka kembali.

Salah satu mantan rekan kerjanya di panti asuhan menambahkan bahwa anak-anak itu sering ditinggal dengan sedikit atau tidak ada samasekali informasi tentang di mana mereka ditemukan atau keadaan yang telah menyebabkan mereka dibawa ke sana. Halangan bahasa sering memperparah masalah-masalah ini. Menurut salah satu penghuni:

*Kadang-kadang nama kami diubah menjadi nama tentara yang membawa kami ke Panti Asuhan Seroja.*²⁶⁵

Selain mengasuh anak-anak sampai saatnya diambil anggota tentara untuk dibawa ke Indonesia, Seroja juga berperan langsung dalam

^{*} Wawancara CAVR dengan Maria Margarida Babo, Dili, [tanggal tidak tercatat], yang bekerja di Seroja sejak 10 hari setelah pembukaannya.

pengiriman kelompok-kelompok anak dari Timor-Leste. Guilherme dos Reis Fernandes diberitahu bahwa dalam dua tahun ketika Seroja berada di tangan militer (sebelum ia mulai bekerja di sana) sekitar 60 anak dikirim ke Indonesia dari panti asuhan itu. Di antara mereka adalah kelompok yang dikenal sebagai “Anak-anak Presiden”, salah satunya adalah Petrus Kanisius Alegria (lihat di bawah, boks setelah paragraf 377). Mário Carrascalão mengatakan kepada Komisi bahwa pendahulunya, Arnaldo dos Reis Araújo, menggunakan panti asuhan itu untuk menyelenggarakan pengiriman anak-anak ke Bandung (Jawa Barat) dan Semarang (Jawa Tengah).

Pada Agustus 1978, Kodam Brawijaya menyerahkan panti asuhan itu kepada Dinas Sosial provinsi. Anggota-anggota tentara masih datang untuk mengunjungi anak-anak yang kira-kira berjumlah 80 anak pada hari-hari libur atau untuk merayakan hari jadi kesatuan mereka. Salah satu mantan penghuni menceritakan bahwa kira-kira pada 1983 setelah kedatangan satu kelompok yang berjumlah 15 anak dari Atauro, anggota-anggota tentara datang secara teratur untuk memeriksa apakah anak-anak itu telah melakukan kontak dengan orangtua mereka.²⁶⁶

Setelah penyerahan panti asuhan ke Dinas Sosial, seorang staf mengingat dalam sebuah pengarahan lisan dikatakan bahwa anak-anak Timor-Leste tidak boleh diadopsi oleh orang-orang dari luar wilayah itu, terutama tentara.

363. Prajurit-prajurit yang lain membawa anak-anak yang telah bertugas dengan mereka sebagai TBO. Alfredo Reinado Alves mengingat keberangkatannya dari Dili dengan kapal laut:

Saya melihat banyak anak yang lain di atas kapal tapi saya tidak tahu ada berapa. Ada tujuh anak di peleton kami. Satu batalion Indonesia mempunyai empat kompi dan satu kompi terdiri atas tiga peleton. Jika kita perkiraan bahwa ada 3-4 anak dalam tiap peleton, maka seluruhnya mungkin ada 30-40 anak. Tapi mungkin ada peleton-peleton yang komandannya mengikuti instruksi dan tidak memperbolehkan anakbuahnya membawa anak-anak pulang dengan mereka.²⁶⁷

364. Kisah Alfredo Reinado Alves juga menggambarkan bagaimana anak-anak ditipu untuk meninggalkan Timor-Leste (lihat boks di bawah, setelah paragraf 419).

365. Komisi juga menerima sejumlah kasus di mana prajurit menculik anak-anak dari keluarga mereka. Di Ponilala, Ermera, seorang anak bernama Veronica diambil dari ibunya pada 1977 ketika umurnya masih delapan tahun. Pada saat itu Manuel Martins bekerja sebagai TBO untuk seorang prajurit yang ia ingat bernama C92, seorang anggota polisi militer. Ia ingat bahwa dirinya melihat C92 memberikan

pakaian dan susu kepada Veronica, memandikannya, dan menggendongnya. C92 mengatakan bahwa ia tidak memiliki anak perempuan dan Veronica seperti anaknya sendiri. Pada hari ketika masa tugas C92 di Ermera berakhir, ia mendatangi rumah Veronica dan membawanya pergi dan hanya meninggalkan sekantong beras. Ia berjanji untuk mendidik dan mengembalikan Veronica ke Timor-Leste tetapi keluarganya setelah itu tidak bisa menghubungi Veronica, walaupun ibunya telah meminta bantuan ICRC untuk mencari anak perempuannya.²⁶⁸

Yuliana (Bileki)

Satu kisah lain berakhir dengan lebih bahagia. Seorang anak perempuan berumur lima tahun, Bileki, dari Dare (Hato Builico, Ainaro) dibawa ke Jakarta pada 1978 oleh seorang prajurit Kopassus, yang telah menolongnya dan memberinya coklat dan hadiah. Setelah selama lima hari tinggal dengan keluarga anggota tentara itu, ia diserahkan kepada dua keluarga lain. Yang terakhir adalah rumah yang baik untuknya dan ia diberi nama Yuliana. Setelah dewasa, menikah, dan memiliki tiga orang anak, Yuliana berusaha mencari keluarganya di Timor-Leste melalui surat kabar namun tidak berhasil. Ia bertemu dengan seorang peneliti Komisi di Jakarta dan berhasil menghubungi keluarganya melalui radio Komisi.²⁶⁹ Yuliana dibawa ke Timor-Leste oleh Komisi pada Juli 2004 dan dipertemukan kembali dengan keluarganya di Ainaro. Ia mengungkapkan kisahnya pada satu audiensi publik Komisi.

Pada suatu hari Minggu setelah misa pertama, saya dikejar-kejar oleh seorang tentara, kemudian saya ditangkap dan dibawa ke lapangan terbang Ainaro dan langsung dinaikkan ke helikopter kemudian dibawa ke Dili. Pada saat hendak dibawa, paman saya tidak mau melepaskan saya karena C93 bukan ayah saya dan saat itu situasi sedang perang dan saya harus berpisah dengan orangtua. Di Dili saya tinggal dengan ibu-ibu tentara di sebuah asrama. Saya sempat hampir tersesat di Dili ketika berusaha melarikan diri untuk mencari orangtua saya, paman saya, dan saudara-saudara saya.

Setelah tiga atau enam bulan di Dili dan perang di Ainaro selesai C93 pulang ke Dili dan langsung saya dibawa ke Jakarta. Di Jakarta saya tinggal dengan C93 kurang dari setahun. Kemudian saya tinggal berpindah beberapa kali. Dari C93 kemudian saya tinggal dengan Pak Ordin, hingga akhirnya saya tinggal dengan bapak angkat saya Tatang Yogosara. Saat itu saya sangat sedih karena masih kecil. Saya sangat kesepian ketika tinggal dengan keluarga Bapak Tatang Yogosara. Pada saat itu yang saya ingat hanya nama orangtua saya, Kuilbere dan Maria, dan kakak saya Maumali serta nama asli saya, Bileki.

Selama tinggal dengan keluarga Bapak Tatang Yogosara saya tidak merasa dibeda-bedakan karena saya orang lain. Saya tinggal dengan keluarga yang saling mengasihi. Mungkin ada saudara-saudara yang bernasib saya seperti saya. Saat ini saya sudah berkeluarga dan punya anak tiga. Suami saya Petrus Tapis, berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi. Ketiga anak saya adalah Veronika Ratu Rosari, Klara Monika Misi, dan Abraham Moris.

Sebenarnya pada 1999 sebelum kerusuhan Timor-Leste saya sudah mencari keluarga saya melalui koran Suara Timor Timor. Di koran tersebut saya tuliskan pesan...Ketika itu hampir ada tanggapan... orang koran STT bilang kalau kakak saya Maumali mencari saya tetapi keburu kejadian 1999. Sejak saat itu tidak ada kontak lagi sampai saya ketemu Ibu Filomena dan Ibu Helena [seorang peneliti yang bekerja untuk Komisi].

Suami saya adalah warganegara yang baik, yang menghargai hak-hak orang, dia tahu saya orang Timor Timur, saya mesti ke Timor Timur, bukan berarti saya meninggalkan keluarga saya dan suami saya, bukan, bukan! Namanya silaturahmi antara saudara, jangan sampai Tuhan panggil saya, sebelum saya bertemu keluarga saya.²⁷⁰

366. Maria Legge Mesquita dibawa oleh anggota-anggota tentara sesudah ayahnya terbunuh di hutan. Ia dan anak-anak lain yang diculik diselamatkan oleh satu keluarga yang ulet ketika mereka akan pergi ke Indonesia:

Ketika tentara siap untuk pergi, setelah masa tugas mereka selesai, mereka mengambil lima anak termasuk saya dan memasukkan kami ke dalam peti-peti. Kami dimasukkan ke dalam peti, tiap peti satu anak, seperti ayam. Saya ingat ada satu keluarga, yang bekerja untuk Palang Merah, yang mencari anak-anak mereka—mereka takut anak mereka sudah dibawa oleh tentara. Mereka menemukan kami dan kami semua dilepaskan. Anggota-anggota keluarga itu lalu dipukuli tapi kami tidak ditemukan lagi dan kami tidak jadi pergi.²⁷¹

367. Kisah Maria menggambarkan bahwa tidak hanya anak-anak diculik, tetapi juga keluarga yang menentang tindakan tersebut dianiaya.

368. Pengalaman QN serupa:

Penculikan seorang bayi di Ermera

Ibu QN mengisahkan kepadanya bagaimana ia hampir diculik oleh seorang anggota militer. QN lahir pada 1978 dan tinggal dengan keluarganya di sebuah kamp konsentrasi di Kota Lama, Ermera. Seorang komandan kompi di kamp, C94 dari Sulawesi* memaksa kakak laki-laknya menjadi TBO. Komandan itu juga ingin membawa QN, tetapi keluarganya menolak. Kemudian QN dimasukkan ke dalam sebuah peti oleh perwira itu dan dibawa ke Dili.

Ibu QN segera melaporkan penculikan itu kepada pastor di Ermera, yang selanjutnya menghubungi para suster dan pastor di Dili. Seorang TBO yang bekerja di Kodim melaporkan kepada suster-suster bahwa di sana ada seorang bayi dari Ermera di dalam sebuah peti di Kodim. Ibu QN segera datang ke Dili dan menghadapi anggota tentara yang telah mengambil anaknya. Ia ditendang berkali-kali karena menolak mundur, tetapi akhirnya ia diperbolehkan untuk melihat bayinya. Untungnya, ia bisa membuktikan bahwa bayi itu adalah anaknya karena ia bisa menunjukkan bahwa bayi itu memiliki tanda lahir di belakang lehernya, dan QN pun dikembalikan ke ibunya.

Namun akibat konfrontasi ini, keluarga QN menanggung akibat yang berat, dan perwira itu masih berusaha membawa bayi itu pergi dengannya. Di Ermera, C94 menembak ibu QN dan menangkap kakak laki-laki QN yang berumur 18 tahun, memukuli dan menyiksanya. Sang kakak dimasukkan ke dalam satu lubang yang penuh dengan kotoran. Di tempat itu beberapa hari kemudian ibunya menemukannya. Dua kakak perempuan QN juga disiksa dan diperkosa oleh C94 dan salah satunya menjadi hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan. C94 kembali ke Ermera dan membawa bayi perempuan itu bersamanya ke Indonesia. Tidak ada berita tentang anak itu yang pernah diterima oleh keluarganya.²⁷²

369. Kisah QN merupakan salah satu dari banyak kisah dalam mana anggota tentara meminta (atau memaksa) persetujuan dari orangtua atau wali untuk membawa anak-anak mereka ke Indonesia.

370. Domingos de Deus Maia, seorang pastor yang bekerja di tempat penampungan di Letefoho (Ermera) pada 1977, mengingat bagaimana para anggota tentara

* Menurut ingatan QN, komandan kompi itu berasal dari Batalion Infanteri 152 tetapi penelitian Komisi mengindikasikan bahwa yang lebih mungkin adalah Batalion Infanteri 122.

memintanya menandatangani satu surat pelepasan anak agar mereka bisa membawa anak itu pulang ke Indonesia. Ia menolak. Tidak lama kemudian, orangtua kedua anak ini memberitahunya bahwa tentara akan mengambil anak mereka secara paksa. Ia segera melapor kepada komandannya, yang beragama Kristen, yang kemudian menghampiri sebuah truk yang sedang dimuati, siap untuk meninggalkan Letefoho (Ermera). Komandan membongkar muatan truk tersebut dan menemukan seorang anak tersembunyi di dalam sebuah peti. Kemudian mulai terdengar adu mulut di antara para prajurit tersebut.²⁷³

371. Kadang-kadang orangtua diminta menandatangani surat adopsi. Mereka memberikan persetujuan karena alasan yang berbeda-beda. Dalam beberapa kasus mereka menyerah karena ancaman dan paksaan terang-terangan. Komisi juga memperoleh kesaksian tentang kasus-kasus yang penekanannya berlangsung lebih terselubung, yang berasal dari suasana yang pada akhirnya membuat mustahil untuk menolak permintaan seorang anggota tentara. Sementara ada juga yang yakin bahwa anak-anak mereka akan lebih aman atau berpendidikan lebih baik di luar Timor-Leste. Dalam situasi yang terakhir, banyak orangtua yang diberitahu bahwa suatu hari anak mereka akan dipulangkan, sebuah janji yang jarang ditepati.

372. Dalam beberapa kasus, surat adopsi resmi dibuat dan ditandatangani oleh pejabat militer. Salah satu berkas surat adopsi ini terdiri atas kesepakatan yang ditulis dengan tangan dengan disaksikan oleh Komandan Koramil Bobonaro, Camat, dan beberapa orang lainnya, bersama dengan satu pernyataan tercetak yang menyebutkan orangtua asli dan orangtua angkat beserta saksi dari masing-masing pihak.* Akan tetapi, lagi-lagi kesepakatan untuk menyerahkan anak untuk diadopsi tidak selalu dibuat secara bebas.

Adopsi paksa: kisah Aida

Pada 1975 saya keluar dari hutan dan tinggal di sebuah kamp di Bobonaro. Suami saya sudah mati dan saya memiliki seorang anak perempuan bernama Constantina, yang kira-kira berumur tiga tahun. Ketika kami tinggal di sana, [seorang tentara Indonesia] bernama C95 biasa membawa anak saya ke pos militer. Setiap pagi dia datang dan membawanya dan di sore hari dia mengembalikannya. Dia selalu mengatakan bahwa itu untuk kesenangan saja. Ini terjadi cukup lama, walaupun begitu saya tidak pernah pergi ke pos militer, kami takut pada tentara. Selalu ada pertanyaan dalam pikiran saya mengapa tentara itu begitu sering datang dan membawa anak saya.

Pada suatu hari, dia datang kepada saya dan bilang: "Saya sangat suka anak anda karena saya sendiri tidak punya anak." Benar bahwa

* Dokumen ini ada dalam Arsip CAVR. Dalam dokumen ini juga tertera tanda tangan Komandan Kompi Markas Batalion 507 dan kepala desa Bobonaro (Bobonaro).

dia tidak terlalu muda—cukup dewasa [untuk mempunyai anak]. Dia meneruskan: “Saya ingin membawa dia pulang. Saya ingin memberinya pendidikan dan setelah itu dia bisa kembali.” Dia berkata bahwa sebagai perempuan yang masih sendiri saya tidak akan bisa menyekolahkan.

Dia mengatakan bahwa saya harus pergi dengannya ke Koramil untuk mencatat nama saya. Ayah dan paman saya juga dipanggil untuk ikut bersama kami. Ada beberapa orang yang di Koramil, tapi saya tidak tahu siapa mereka dan saya tidak bisa membaca. Saya tidak tahu apakah komandan ada di sana. Saya tidak tahu apakah semua orang yang menandatangani benar-benar ada di sana. Temukung (kepala desa saya) juga tidak bisa membaca surat-surat itu dan tidak tahu apa yang mereka katakan karena kami tidak tahu bahasa Indonesia dan mereka tidak memberitahu saya siapa mereka. C95 hanya mengatakan bahwa dia ingin mengirimnya ke sekolah dan kemudian dia akan kembali. Dia memberi saya sedikit uang tapi tidak lebih daripada itu.

C95 sudah siap untuk pergi. Tas-tasnya sudah dikemas. Setelah dia pergi keluarga saya mengatakan bahwa saya telah meninggalkan cap ibu jari saya [di surat-surat itu] dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya menyerahkan anak saya karena saya takut. Mereka punya senjata dan saya merasa saya tidak punya pilihan. Tapi sekarang saya hidup dengan harapan akan janji orang itu bahwa suatu hari anak saya akan kembali ke saya...Saya sering pergi ke pinggir laut, menghirup udara segar dan mengingat anak saya yang diambil dari saya yang berada di seberang laut itu.²⁷⁴

Apakah pemindahan anak-anak adalah kebijakan resmi militer?

373. Komisi menemukan sedikit bukti bahwa pengambilan anak-anak Timor-Leste ke Indonesia merupakan kebijakan resmi militer.^{*} Bukti justru memperlihatkan bahwa, setidaknya ketika anggota tentara berpangkat rendah terlibat, para perwira militer yang berpangkat lebih tinggi tidak menyetujui praktik ini. Satu pola yang umum untuk beberapa kasus yang dikutip di atas adalah anak-anak dibawa secara diam-diam—dimasukkan ke dalam peti dan diselundupkan keluar dengan kapal. Alfredo Alves (lihat boks di bawah, setelah paragraf 419) ingat dirinya disembunyikan di dalam sebuah peti setelah mendengar polisi militer mengatakan bahwa para prajurit itu tidak diperbolehkan membawa anak-anak pulang ke Sulawesi. Keterangan Domingos de Deus Maia mengenai prajurit yang dihukum oleh komandan mereka karena membawa anak-anak adalah bukti tambahan bahwa para anggota tentara bertindak atas inisiatif sendiri.

^{*} Walaupun ada desas-desus mengenai dokumen militer yang menginstruksikan kepada anggota tentara untuk membawa anak-anak ke Indonesia untuk mendidik mereka sebagai Muslim, Komisi tidak dapat menemukan dokumen tersebut.

374. Ada bukti bahwa setelah beberapa tahun militer berusaha mengatur pemindahan anak-anak dengan mensyaratkan, misalnya, persetujuan dari orangtua dan pejabat yang berwenang.^{*} Namun, tidak ada cukup bukti untuk memastikan apakah langkah ini sudah cukup untuk mengurangi jumlah anak-anak yang dibawa ke Indonesia. Dalam praktik, dalam suasana pemaksaan yang berlaku, langkah seperti ini tidak bisa menjamin bahwa persetujuan orangtua diberikan secara bebas. Ada cukup banyak bukti bahwa para anggota tentara menghindari peraturan, seperti yang terjadi dalam sejumlah kasus anak-anak yang diselundupkan keluar Timor-Leste dengan kapal. Lebih jauh, tidak ada kepastian bahwa setelah di Indonesia, seorang anak yang dipindahkan itu diasuh oleh keluarga dari anggota tentara yang telah menandatangani kesepakatan atau bahwa anak itu mendapat pendidikan. Ada bukti yang berlimpah bahwa anak-anak diserahkan kepada keluarga yang menginginkan anak, atau ditempatkan di sebuah lembaga. Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa praktik penyerahan anak-anak dengan cara ini berada di dalam suatu sistem regulasi.

Pemindahan oleh pejabat pemerintah dan organisasi amal

375. Tidak hanya anggota tentara yang mengambil anak-anak dari Timor-Leste ke Indonesia pada tahun-tahun setelah invasi. Pejabat-pejabat pemerintah dan yayasan-yayasan amal, termasuk keluarga Presiden Soeharto, juga terlibat. Kegiatan-kegiatan mereka pada umumnya terorganisasi dengan baik dan mereka konon memberikan pendidikan kepada anak-anak Timor-Leste. Namun lagi-lagi tidak ada peraturan yang memadai, anak-anak diambil tanpa izin orangtua dan hak orangtua untuk tetap berhubungan dengan anak-anak mereka sering diabaikan.

376. Komisi mendapatkan informasi mengenai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta yang datang ke Timor-Leste dan berusaha meyakinkan para orangtua untuk mengirim anak-anak mereka ke Indonesia di mana mereka akan disekolahkan. C96 berasal dari Timor Barat, tetapi sebelum invasi Indonesia ia tinggal di Desa Beobe (Viqueque). Ia kemudian menjadi anggota DPR, mewakili Provinsi Timor Timur. Pada 1977, ia mendekati sejumlah orangtua, termasuk seorang perempuan bernama Ana Maria dan menjanjikan kepada mereka bahwa anak-anak mereka akan memperoleh pendidikan di Jawa. Ana Maria setuju mengirimkan anaknya, Cipriano. Beberapa hari kemudian C96 datang dan menjemput Cipriano bersama dengan empat anak lainnya dari desanya dan tiga lagi dari desa lain dan membawa mereka dengan helikopter tentara. Menurut pamannya, Duarte Sarmento, Cipriano dan saudara sepupunya diserahkan kepada C96 dengan persetujuan orangtua mereka karena keadaan yang sulit pada saat itu, tetapi mereka diberitahu bahwa mereka akan diberi alamat anak-anaknya di Jawa. Saudara sepupu Cipriano kembali ke Timor-Leste untuk kali pertama pada 1984 tetapi tanpa Cipriano. Ia mengatakan kepada keluarganya

^{*} Izin mungkin tidak sulit diperoleh. Seorang staf Panti Asuhan Seroja mengatakan kepada Komisi tentang seorang anak laki-laki bernama Thomas yang pernah tinggal di Seroja. Perwakilan dari Persatuan Istri Tentara (Persit), datang ke panti asuhan ini dengan surat rekomendasi dari organisasinya dan surat izin dari Departemen Sosial untuk mengadopsi anak laki-laki berusia dua tahun itu. Wawancara CAVR dengan Maria Margarida Babo, Dili, tidak bertanggal.

bahwa istri dari seorang tentara mengunjungi rumah yatim-piatu dan membawa dua anak bersamanya, Cipriano dan seorang anak perempuan dari Ainaro.⁷

377. Yayasan-yayasan keluarga Soeharto berperan penting dalam pendanaan lembaga-lembaga yang terlibat dalam mencari, memindahkan, memberikan akomodasi, dan mendidik anak-anak Timor-Leste pada periode ini. Pensiunan perwira militer, yang sudah dikutip tentang jumlah anak-anak yang diambil oleh tentara, menjelaskan bahwa sebagian besar anak-anak ditempatkan di lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh orang-orang Muslim, Katolik, atau Protestan. Biaya pendidikan mereka biasanya dibayar oleh Yayasan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), satu yayasan yang didanai dan dikelola oleh keluarga Soeharto.²⁷⁵ Nilai propaganda dari keterlibatan ini tergambarkan dari pemindahan yang mencolok sejumlah anak ke Jawa yang dikenal sebagai “Anak-anak Presiden”.

“Anak-anak Presiden”

Pada 1977 satu kelompok yang terdiri atas 20 anak dikirimkan ke Jawa, rupanya dengan maksud memperbaiki pandangan umum tentang Timor-Leste. Petrus Kanisius Alegria, salah seorang dari beberapa “perwakilan” dari Distrik Aileu, adalah yang paling tua dalam kelompok itu:

Pada 1 September 1977 saya bersama beberapa anak lainnya dibawa ke Jakarta. Kami dibawa oleh Letnan Kolonel Mulyadi [dari Sulawesi]. Gubernur Timor Timor ketika itu adalah Arnaldo dos Reis Araújo. Beliau juga bersama kami ke Jakarta. Keluarga kami tidak diberitahu bahwa kami akan dibawa ke Jakarta. Kami tiba di Jakarta tanggal 6 September 1977.²⁷⁶

Petrus Kanisius Alegria dibawa ke Panti Asuhan Seroja pada April 1977 oleh anggota tentara dari Komando Distrik Militer (Kodim) Aileu. Orangtuanya meninggal sebelum invasi dan dia tinggal dengan seorang kakak laki-lakinya di Aileu ketika seorang anggota tentara dari Kodim memberitahu kakak laki-lakinya bahwa mereka mencari anak-anak berumur 10-11 tahun yang orangtuanya sudah mati di hutan untuk dikirim ke Dili untuk disekolahkan.²⁷⁷ Kakaknya tidak diberi tahu mengenai pengiriman Petrus ke Indonesia, dan dengan demikian tidak memberikan persetujuannya.

* Wawancara CAVR dengan Duarte Sarmiento, Kupang, tidak bertanggal; Wawancara CAVR dengan seorang anak [nama dirahasiakan], Bandung, Indonesia, 28 dan 31 Januari 2004. Seorang anak lain, pergi dengan anggota-anggota tentara secara sukarela dan diberi beberapa kesempatan untuk mengunjungi keluarganya di Timor-Leste, tetapi selalu memilih untuk kembali ke Jawa. Wawancara CAVR dengan Achmad Viktor da Silva, Jakarta, Indonesia, Maret 2003 dan 22 Januari 2004.

Anak-anak itu, yang rata-rata berumur 10 tahun dan datang dari distrik-distrik bagian barat dan tengah, dikirimkan dengan pesawat angkut militer Hercules.²⁷⁸ Setibanya di Jakarta mereka dibawa ke tempat-tempat pariwisata seperti Taman Mini (Jakarta Timur) dan menghadiri upacara penyambutan yang dihadiri oleh Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sultan Hamengkubuwono IX. Presiden mengatakan kepada mereka:

*Kalian adalah anak-anak kami, milik negara, dan mulai sekarang kami akan bertanggung jawab atas kesejahteraan kalian, mulai makanan, pakaian, dan sekolah, termasuk pendidikan selanjutnya, adalah tanggung jawab negara.*²⁷⁹

Pengiriman anak-anak ini didukung oleh Yayasan Dharmais, salah satu yayasan Soeharto. Arnaldo dos Reis Araújo, Gubernur Timor Timur, mengirimkan sepucuk surat bertanggalkan 25 Agustus 1977 kepada Yayasan Dharmais.* Ada satu persetujuan yang ditandatangani oleh Dharmais dan Panti Asuhan Santo Thomas di Ungaran (Semarang, Jawa Tengah), bertanggalkan 4 Agustus 1977,† yang menyebutkan Dharmais berjanji untuk membiayai makanan, pakaian dan pendidikan anak-anak itu.‡ Soeharto mengatakan kepada media bahwa yayasannya akan memberikan Rp150 setiap hari untuk setiap anak. Walaupun ada jaminan seperti itu, menurut Petrus Kanisius Alegria, panti asuhan tersebut tidak menerima dana yang cukup untuk merawat anak-anak itu dengan baik.²⁸⁰

1980 - 1989

378. Pada dasawarsa 1980-an praktik tentara membawa anak-anak ke Indonesia masih berlanjut. Banyak dari anak-anak ini adalah anak yatim-piatu atau terpisah dari orangtua mereka. Jumlah anak yatim-piatu di Timor-Leste pada saat itu sangat tinggi; Mário Viegas Carrascalão pernah memprakarsai satu penelitian dan mendapatkan jumlah lebih daripada 40.000 anak, yang kebanyakan berada di lembaga:

* Tembusan surat Gubernur Arnaldo dos Reis Araújo disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial di Jakarta serta Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial di Dili. Juga kepada Koordinator Wilayah (Korwil), Komando Daerah Pertahanan Keamanan (Kodahankam) dan Komandan Komando Resor Militer/Daerah Pertahanan Keamanan (Danrem Dahankam).

† Disaksikan oleh Bupati Semarang (Jawa Tengah) Iswarto dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial di Semarang, Kardoyo Karjosoemarto. Dari pihak Panti Asuhan St. Thomas, yang menandatangani adalah Suster Petrona dan dari Dharmais yang menandatangani adalah Soedardi.

‡ "Anak-anak diserahkan...supaya mereka mendapat perawatan, pelayanan, pembinaan, serta pendidikan yang baik. Biaya makan, pakaian, dan pendidikan dari anak-anak tersebut menjadi tanggungan dari Yayasan dan disesuaikan dengan kemampuan serta ketentuan yang berlaku pada Yayasan Dharmais."

Masalahnya adalah yang tidak dalam perawatan Misi Katolik. Ini dipergunakan oleh militer. Ada sebagian yang menyukai anak-anak berkulit putih. Mereka suka anak-anak yang berdarah campuran. Anak-anak ini yang mereka bawa ke Indonesia.²⁸¹

379. Pada dasawarsa 1980-an muncul satu pola baru anak-anak diambil oleh pejabat sipil dan perwira militer tingkat tinggi. Menurut Mário Carrascalão:

Ketika personel angkatan bersenjata Indonesia kembali ke Indonesia, mereka selalu membawa anak-anak. Semua perwira berpangkat tinggi, seperti [Brigadir Jenderal] C101 [Panglima Kolakops – Komando Pelaksana Operasi 1990-1991] dan [Brigadir Jenderal] C102 [Panglima Kolakops 1987-1988] membawa anak-anak pulang dengan mereka.²⁸²

380. Mayor Jenderal TNI C103 bertugas sebagai seorang perwira intelijen Kopassus di Timor-Leste pada dasawarsa 1980-an dan kembali pada 1999 sebagai wakil TNI pada Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur. Ia memiliki sekitar 10 orang anak laki-laki yang tinggal di rumahnya di Jakarta. Mereka termasuk saudara-saudara sepupu Mário Freitas dan Hercules, yang orangtuanya terbunuh sewaktu serangan bom pada 1978. Mereka bekerja di kebun, membersihkan, dan melakukan tugas jaga. Mário Freitas melarikan diri setelah dipaksa beragama Islam dan selanjutnya dididik oleh pastor-pastor Katolik di Jakarta dan Bali, sementara Hercules menjadi pemimpin gerombolan di Jakarta.²⁸³ C104 juga “mengadopsi” 10 pemuda Timor-Leste.’

Kasus Thomas da Costa

Thomas da Costa lahir di Lospalos (Lautém) pada 3 April 1980. Ketika ABRI menyerang Fretilin di hutan, ayahnya, seorang anggota Fretilin, tertembak mati. Thomas, yang pada waktu itu berumur lima tahun, bersama keluarganya ditangkap oleh tentara Indonesia dan dibawa ke Koramil di Iliomar (Lautém). Para prajurit memisahkan Thomas dari ibunya dan anggota keluarga lainnya dan membawa mereka ke barak Batalion 745 di Lospalos, di mana ia diserahkan kepada Mayor C105 dari Batalion 745.

* Keith Loveard, “Rising 2-Star,” *Asiaweek*, 13 April 1997. Mário Carrascalão mendengar bahwa ketika istri Prabowo, anak perempuan Presiden, Titiék Soeharto, datang ke Timor-Leste pada awal 1990-an, ia meminta kepada Wakil Gubernur, Brigadir Jenderal A.B. Saridjo, untuk mencari seorang anak yang orang tuanya berjuang di gunung-gunung dan tidak dapat mengambil anaknya kembali. Menurut Mário Carrascalão, seorang anak dari Lospalos (Lautém) dikirimkan ke Jakarta, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, walaupun ia mendengar bahwa istri Prabowo ingin mengembalikan anak itu. Wawancara CAVR dengan Mário Carrascalão, Dili, 12 September 2003.

Setelah beberapa hari interogasi, Mayor C105 mulai memberi pekerjaan kepada Thomas seperti mengumpulkan kayu bakar, memasak, mengambil air, dan mencuci pakaian. Selama beberapa bulan Thomas tinggal dengan Batalion 745 sebelum C105 memberi tahu padanya bahwa ia akan mulai bersekolah di sekolah dasar terdekat. Ia bersekolah tetapi tetap bekerja untuk militer.

Pada sekitar 1989, Mayor C105 kembali ke Indonesia dan membawa Thomas bersamanya ke desanya di Bantul (Yogyakarta, Indonesia). Keluarga C105 mengasuh Thomas dan ia bersekolah di sekolah dasar Bantul untuk setahun lagi sebelum kelulusan. Kemudian ia melanjutkan ke sekolah menengah pertama, tetapi pada sekitar waktu itu istri C105 mulai memukuli dan memperlakukannya seperti pembantu. Setelah satu kejadian Thomas dianiaya oleh C105 dan istrinya, mereka membentakinya, “Kamu anak Fretilin! Pulang ke tempatmu sendiri!” Thomas melarikan diri dan menemukan sebuah kapal yang bisa membawanya pulang. Ia tiba di Dili pada 11 Mei 1988 dan naik bis ke Lospalos di mana ia bertemu kembali dengan keluarganya.²⁸⁴

381. Ada beberapa kemungkinan alasan mengapa pejabat sipil dan perwira militer tingkat tinggi mendukung pengiriman anak-anak. “Adopsi” publik anak-anak mungkin dimaksudkan untuk memperkuat kesan bahwa Timor-Leste adalah bagian dari Indonesia. Janji untuk memberikan pengasuhan adalah sebuah gambaran mengenai penegasan Indonesia bahwa Indonesia akan membangun wilayah itu, tidak seperti Portugal, dan ada keyakinan bahwa hal ini akan memperkuat klaim kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste. Tidak diketahui apakah anak-anak tersebut mengalami suatu bentuk perbudakan di Indonesia.

Lembaga keagamaan dan pemindahan anak-anak

382. Pada dasawarsa 1980-an sejumlah lembaga keagamaan Indonesia juga mulai aktif di Timor-Leste. Satu aspek penting mengenai kegiatan mereka adalah pengiriman anak-anak ke berbagai sekolah keagamaan di Indonesia. Salah satu lembaga keagamaan yang paling penting adalah satu badan dakwah yang bernama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Menurut kepala masjid Sultan Alauddin yang berafiliasi DDII di Makassar (Sulawesi Selatan), ada beberapa pendakwah DDII yang bekerja di Timor-Leste sejak 1983. Namun, karena para pendakwah itu tidak bisa melakukan kegiatan mereka dengan bebas, DDII mengatur pengiriman anak-anak dari Timor-Leste ke Makassar antara akhir dasawarsa 1980-an dan awal dasawarsa 1990-an. Ada laporan bahwa pengiriman-pengiriman ini dilaksanakan bekerja sama dengan anggota-anggota “Bimbingan Mental dan Rohani” militer.²⁸⁵

383. Pada 1982, Yayasan Kesejahteraan Islam Nasrullah (Yakin), didirikan di tanah yang luas di Culuhun (Dili). Organisasi ini mendirikan sekolah dasar dan sekolah menengah, termasuk satu sekolah teknik menengah dan satu pesantren dengan

akomodasi untuk para pelajar dari distrik-distrik.* Yakin merekrut pelajar dari keluarga-keluarga miskin di Lautém, Baucau, Viqueque, dan Manufahi, yang tidak semuanya Muslim.

384. Antara 1983 dan 1999, Yakin menyelenggarakan pengiriman sebagian dari anak-anak ini, yang mencakup anak-anak yatim-piatu, ke pesantren di Indonesia. Sebagian besar dari mereka berumur 10 tahun atau di atasnya.²⁸⁶ Salim Sagraan, Ketua Yakin, mengatakan kepada seorang peneliti Komisi bahwa Yakin mendapatkan persetujuan resmi dari para orangtua. Tetapi Komisi tidak bisa memverifikasi hal ini karena diberi tahu bahwa semua berkasnya hilang pada 1999.† Wawancara-wawancara oleh petugas Komisi dan para peneliti independen dengan para orangtua anak-anak yang dibawa ke Indonesia melalui jaringan Yakin telah gagal untuk menegaskan bahwa para orangtua memang menandatangani formulir persetujuan. Yayasan-yayasan lain yang dilaporkan mengirimkan anak-anak untuk belajar di sekolah-sekolah Muslim adalah Hidayatullah, An-Nur, dan Yayasan Lemorai.²⁸⁷

385. Anak-anak Timor-Leste yang direkrut oleh organisasi semacam DDII dan Yakin pergi belajar di berbagai lembaga Islam di seluruh Indonesia. Kelompok yang mungkin terbesar adalah kelompok yang ada di Sulawesi Selatan dan Bandung, tetapi ada juga yang bersekolah di wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi), di Jawa Tengah (Salatiga), dan Jawa Timur (Surabaya, Jombang, dan Malang). Seorang peneliti independen memberitahu Komisi bahwa koordinator Mahasiswa Muslim Asal Timor Timur (Mamtim) mengatakan padanya bahwa sangat sulit untuk melacak identitas atau jumlah anak-anak itu karena tidak ada berkas yang disimpan. Anak-anak itu tidak diawasi oleh satu organisasi apapun dan pada kedatangannya di berbagai panti asuhan dan pesantren, nama mereka banyak yang diubah. Yakin dan An-Nur disebutkan mendanai pendidikan mereka, dengan maksud agar setelah mereka lulus mereka kembali ke Timor-Leste untuk menyebarkan agama Islam.²⁸⁸

1990-1998

386. Praktik anggota tentara membawa anak-anak ke Indonesia ternyata berlanjut dalam dasawarsa 1990-an. Leonel Guterres ingat bahwa anak-anak dibawa pergi dari Quelicai (Baucau) oleh anggota-anggota tentara pada 1993-1995. Ada satu kelompok yang terdiri atas 13 orang anak, berumur dari lima sampai 10 tahun, semua berasal dari keluarga miskin. Anggota-anggota tentara bertanya kepada para

* DDII mendirikan Yakin pada tanggal 18 Juli 1981, George J. Aditjondro, "Yayasan-yayasan Suharto: Cakupan, Dampak, dan Pertanggungjawabannya," 31 Januari 1998, halaman 134, <<http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/4427/mpr.htm>> pada 30 Maret 2005.

† "Yakin mencari pelajar menurut kriteria [jumlah, umur dan jenis kelamin] dari lembaga yang meminta di Indonesia. Jika mereka sudah ada di lembaga di Culuhun, Dili, para pelajar tersebut akan dikirimkan; kalau tidak mereka akan mengirimkan seorang perwakilan atau anggota staf ke distrik-distrik untuk memberitahu ustad, guru agama di mesjid, mengenai permintaan untuk mendapatkan anak-anak. Dia mengumpulkan mereka dan membawa mereka ke Dili." Wawancara dengan Salim Sagraan sebagaimana dikutip dalam Helene van Klinken, *Islamic Children Educated in Indonesia*, Submisi kepada CAVR, 2003, halaman 5.

orangtua apakah mereka bisa membawa anak mereka, tetapi Leonel mengatakan bahwa menghadapi permintaan seperti itu dari tentara, tidak ada pilihan lain. Sebagian dari anak-anak ini telah kembali ke rumah mereka di Quelicai.²⁸⁹

Anak-anak yang dibawa oleh lembaga-lembaga keagamaan

387. Pada dasawarsa 1990-an, ada peningkatan jumlah anak-anak yang dipindahkan ke Indonesia dengan sponsor dari lembaga keagamaan. Sementara pada awal pendudukan Indonesia kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi Islam dibatasi, pada pertengahan dasawarsa 1990-an meningkatnya pengaruh Islam di Indonesia memungkinkan organisasi-organisasi ini beroperasi lebih terbuka di Timor-Leste. Yayasan-yayasan berpusat di Timor-Leste dan organisasi-organisasi nasional meneruskan perekrutan anak-anak untuk belajar di pesantren atau lembaga-lembaga lain di seluruh Indonesia.

388. Sebagian besar, namun tidak semua, dari anak-anak ini berasal dari komunitas yang sudah sejak dulu Muslim ataupun yang baru menjadi Muslim. Sering, orang-orang Timor-Leste, yang sudah dibawa ke Indonesia untuk belajar dalam tahun-tahun sebelumnya, kembali ke Timor-Leste setelah lulus dan merekrut pelajar generasi baru. Sebagian pelajar yang didekati dengan cara ini bukan Muslim, tetapi melihat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Setelah sampai di Indonesia, mereka diberi nama baru dan didorong untuk bertukar agama. Lembaga-lembaga Muslim juga pergi ke wilayah-wilayah miskin dan terpencil untuk merekrut anak-anak, menjanjikan kepada orangtua bahwa mereka akan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka dan kemudian akan memulangkan mereka.

389. Tampaknya keluarga-keluarga Muslim dan bukan Muslim mengalami kesulitan mempertahankan hubungan dan menjamin kepulungan anak-anak mereka. Ketika seorang pelajar yang telah menyelesaikan pendidikannya di suatu lembaga akan pulang pada 2000, banyak teman yang berasal dari Timor-Leste bertanya kepadanya bagaimana mereka juga bisa kembali ke Timor-Leste. Sebagian besar dari mereka berasal dari Manufahi, Viqueque, Baucau, dan Lautém; beberapa tidak tahu siapa orangtua mereka karena mereka dibawa pergi ketika masih sangat kecil.²⁹⁰

Program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Tenaga Kerja

390. Pada dasawarsa 1990-an, departemen-departemen pemerintah juga melaksanakan program-program di Timor-Leste yang melibatkan pengiriman anak-anak ke Indonesia. Program-program ini seolah-olah diciptakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesempatan kerja bagi pemuda Timor-Leste dan dalam pengertian itu bukan merupakan pelanggaran hak anak. Tetapi, Komisi mendapatkan keterangan bahwa anak-anak dipaksa berpartisipasi dalam program-program itu, yang merupakan suatu pembatasan terhadap kebebasan bergerak mereka. Lebih jauh, ini menunjukkan bahwa pengiriman paksa anak-anak menjadi kebijakan pemerintah untuk tujuan politik dan keamanan.

391. Program-program Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) kelihatannya bertujuan utama mengurangi banyaknya pemuda menganggur yang siap berpartisipasi dalam berbagai demonstrasi atau bentuk-bentuk lain kegiatan politik. Depnaker meluncurkan program pertamanya pada 1990, bekerja sama dengan Yayasan Tiara pimpinan Siti Hardiyanti Rukmana, anak Presiden Soeharto, untuk membawa orang-orang muda Timor-Leste bekerja di Indonesia. Anak-anak dikirim untuk bekerja di berbagai pabrik yang terkait dengan keluarga Presiden, seperti pabrik Indocement di Cibinong (Bogor, Jawa Barat), dua pabrik tekstil, Kanindotex di Bawen (Semarang, Jawa Tengah) dan Sritex di Sukoharjo (Solo, Jawa Tengah), serta pabrik kayu Barito Pacific di Kalimantan Timur.²⁹¹

392. Peluncuran program-program ini dilakukan segera setelah adanya keputusan untuk membuka Timor-Leste. Mungkin yang lebih bermakna, peluncuran ini bertepatan dengan awal gelombang demonstrasi, protes, dan ketidakpuasan sosial umum yang menjadi ciri berkelanjutan pada dasawarsa terakhir pendudukan Indonesia. Sebagian dari perwujudan ketidakpuasan ini, seperti ketegangan etnis dan keagamaan yang bergejolak di seluruh wilayah pada Januari 1995, jelas terkait dengan kekecewaan yang semakin meningkat di antara pemuda pengangguran Timor-Leste.

393. Sering janji mengenai pekerjaan dengan upah yang bagus, yang menarik orang muda untuk datang ke Jawa dan bagian-bagian lain Indonesia, tidak dipenuhi. Satu laporan Asia Watch tahun 1992 mengemukakan bahwa para pemuda yang meninggalkan Timor-Leste sebagai bagian dari program pada umumnya pergi dengan sukarela tetapi:

karena mereka dikelabui mengenai keadaan yang sebenarnya dari pekerjaan dan pelatihan yang akan mereka dapat dan karena mereka tidak mempunyai uang untuk kembali, seluruh proyek ini tidak berbeda dengan kerja paksa.²⁹²

394. Keterangan-keterangan tangan pertama mengindikasikan bahwa militer sangat terlibat dalam perekrutan para pekerja muda, termasuk memaksa para pemuda bergabung dalam program ini. João da Costa, dari Baucau, saat itu berumur 17 tahun dan terlibat dalam kegiatan bawahan ketika seorang kerabatnya yang bertugas dalam militer Indonesia menekannya untuk bergabung dalam program Depnaker. João da Costa adalah salah seorang dari satu kelompok yang terdiri atas 75 pemuda yang direkrut untuk bekerja di Indonesia pada saat itu. Beberapa anggota kelompok itu berusia lebih muda darinya, semua, kecuali lima orang dari mereka, adalah lelaki dan hampir semua berasal dari Dili atau Baucau. Militer mengatur transportasi mereka ke Dili, di mana mereka ditempatkan di akomodasi militer dan kemudian mewawancarai para pemuda itu. João ditanya apakah ia tahu mengenai Fretilin atau apakah ia terlibat dalam demonstrasi Santa Cruz. Mereka juga mendapat pelatihan seperti militer, yang disebut pelatihan “Fisik, Mental, Disiplin – FMD”, dari Batalion Infanteri 744.²⁹³

395. Saat tiba di tempat tujuannya, Makassar (Sulawesi, Indonesia), João diberi uang saku dan mengikuti kursus tukang bangunan dan praktik kerja yang diselenggarakan

oleh Depnaker, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang telah dijanjikan. Akhirnya ia mendapatkan pekerjaan tetapi pada Maret 1999 ia kembali ke Timor-Leste berkampanye untuk Jajak Pendapat, bersama dengan sebagian besar orang lainnya di dalam kelompok itu.²⁹⁴

1999*

396. Ada banyak laporan mengenai anak-anak yang dibawa ke Indonesia setelah Jajak Pendapat. Sebagian dari kasus-kasus ini terjadi dalam konteks evakuasi anak-anak keluar dari Timor-Leste demi keselamatan anak-anak itu. Panti Asuhan Seroja, misalnya, mengungsikan anak-anak asuhannya pada September 1999 setelah milisi mengambil kendaraan-kendaraan milik Seroja dan mengancam bahwa mereka akan menyerang panti asuhan anak yatim itu dengan granat apabila stafnya tidak mengevakuasi penghuninya.²⁹⁵ Dengan mengambil jalur jalan yang digunakan oleh orang-orang yang diungsikan dengan paksa dari Dili pada saat itu, 74 anak yang tinggal di Seroja, serta para pegawai dan keluarga mereka, dibawa ke kantor polisi dan kemudian ke pelabuhan Dili untuk selanjutnya diberangkatkan ke Kupang (Indonesia) dengan sebuah kapal. Setelah 10 hari, para pejabat dari kantor pusat Kinderdorf di Bandung (Jawa Barat) menolong mereka untuk pergi ke panti asuhan anak yatim Kinderdorf di Flores (Nusa Tenggara Timur, Indonesia). Pada 4 November 1999, anak-anak itu diserahkan ke UNHCR, yang membawa mereka kembali ke Timor-Leste. Mereka tinggal di Susteran Carmelita sampai mereka bisa dikembalikan ke keluarga masing-masing. Beberapa anak tidak bisa menemukan keluarga mereka dan tetap tinggal di biara tersebut.²⁹⁶

397. Kekacauan pada pekan-pekan sesudah Jajak Pendapat menimbulkan suasana yang mendorong pemindahan anak-anak keluar dari Timor Barat. Banyak anak yang terpisah dari keluarga mereka, baik karena orangtua mereka pergi bersembunyi atau karena kehilangan mereka di tengah-tengah kekacauan. Banyak yang dilindungi oleh orang-orang yang mengangkat diri sebagai pelindung. Para orangtua dan pelindung yang hidup dalam kondisi kekurangan serta intimidasi militer dan milisi di kamp-kamp di Timor Barat, merasa tawaran untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka di luar kamp itu menarik dan mungkin akan cepat-cepat menandatangani persetujuan dengan lembaga yang menawarkan keamanan dan topangan hidup bagi anak-anak mereka. Dalam kondisi seperti itu, tidak bisa dikatakan bahwa orangtua selalu memberikan persetujuan mereka secara bebas atau memahami sepenuhnya konsekuensi dari keputusan mereka.[†] Lebih lanjut, seperti yang digambarkan dalam

* Banyak anak yang diambil dari kamp-kamp di Timor Barat dan dikirimkan ke lembaga-lembaga di Indonesia dipisahkan dari orangtua mereka setelah Oktober 1999, akhir dari periode mandat CAVR. Namun, karena pemisahan tersebut terjadi akibat kejadian-kejadian September 1999 dan merupakan kelanjutan dari praktik-praktik yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, bagian ini tidak akan lengkap tanpa sekurangnya pembahasan singkat mengenai praktik ini.

† Sebaliknya, tampak bahwa sebagian orangtua ditekan untuk melepaskan anak mereka tanpa mengetahui konsekuensi penuh dari persetujuan yang dimaksud. Beberapa dipaksa menandatangani lembar formulir persetujuan, menyerahkan hak asuh dan kunjungan orangtua kepada anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus, setelah orangtua kembali ke Timor-Leste dan mencari jalan untuk mendapatkan anak mereka kembali, para pengasuh menolak memperkenankan anak-anak itu kembali atau menun-

kasus di bawah ini, kondisi anak-anak ini tidak selalu seperti yang dijanjikan oleh lembaga-lembaga itu.

398. Lembaga Protestan Yayasan Cinta Damai bekerja di Timor-Leste di masa pendudukan Indonesia dan beroperasi di Matata, Ermera. Yayasan ini mendekati para orangtua dan meminta agar anak-anak mereka dibawa ke Kupang (Timor Barat, Indonesia) untuk disekolahkan di bawah pengawasan yayasan tersebut. Anak-anak tersebut sebanya di Kupang hanya ditampung sementara di Panti Asuhan Gereja Oebaha, Kupang, sebelum akhirnya diserahkan ke keluarga-keluarga yang akan menjadi keluarga angkat mereka. Karena sering ditelantarkan, sebagian dari anak-anak tersebut kini telah kembali ke orangtua mereka, di Timor-Leste tetapi sebagian masih tetap tinggal di Kupang. Setelah Jajak Pendapat, para orangtua dari anak-anak tersebut mengadukan hal ini kepada UNHCR dan Jesuit Refugee Service (JRS) di Kupang.²⁹⁷

399. Organisasi-organisasi lain, yang tak punya sejarah mengirim anak-anak dari Timor-Leste, baru menjadi aktif setelah Jajak Pendapat. Yang paling dikenal dari mereka adalah Yayasan Hati, yang mengirimkan sekitar 150 anak dari berbagai kamp di Timor Barat ke Jawa Tengah. Anak-anak itu ditempatkan di lembaga-lembaga Katolik atau di satu lembaga swasta di Wonosari (Jawa Tengah), 45 km di sebelah timur Yogyakarta. Lembaga di Wonosari tersebut didirikan oleh seorang mantan pejabat pemerintah Indonesia yang pernah bekerja di Dili sebagai kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.²⁹⁸

400. Keadaan yang kacau seputar pemindahan anak-anak ke Jawa Tengah terus memperlambat harapan mereka untuk bergabung kembali dengan keluarga mereka. Peninggalan pahit penarikan Indonesia dari Timor-Leste semakin memperkeruhnya. Pada November 2000, anak-anak ini menjadi topik dalam satu rapat antarlembaga yang memberi perhatian pada situasi mereka. JRS menyatakan dalam rapat bahwa dari 118 anak di berbagai lembaga di Jawa Tengah, keluarga dari 83 anak dipercaya masih berada di Timor Barat. Banyak yang tinggal di Kamp Tuapukan, Kupang (Nusa Tenggara Timur, Indonesia) dan dianggap bermaksud tetap tinggal di Indonesia. Sebagian besar keluarga ini dilaporkan berasal dari Beobe (Viqueque).²⁹⁹

401. UNHCR dan IRC pergi ke Viqueque untuk melacak anggota keluarga dan menemukan bahwa, dalam beberapa kasus, bukan orangtua yang mengatur pengiriman anak-anak itu ke Jawa melainkan para pelindung (termasuk anggota keluarga besar dengan siapa anak-anak itu mungkin akan tinggal seumur hidupnya). Delapan orangtua di Timor-Leste meminta bantuan dari UNHCR untuk mengembalikan anak-anak mereka.³⁰⁰ Sejumlah anak di Jawa Tengah telah mengatakan bahwa mereka ingin bergabung kembali dengan keluarga mereka setelah menyelesaikan sekolah menengah atas. Beberapa keluarga di Timor Barat sudah mengunjungi anak-anak mereka.

.....
tut ganti rugi finansial untuk pengembalian mereka." United Nations High Commissioner for Refugees, Evaluation and Policy Analysis Unit, *Evaluation of UNHCR's repatriation and reintegration programme in East Timor, 1999-2003*, dipersiapkan oleh Chris Dolan, Judith Large, Naoko Obi, UNHCR, Jenewa, 24 Februari 2004, halaman 60.

402. Sulit menyatukan kembali para orangtua dengan anak-anak mereka setelah pemindahan mereka dari kamp-kamp karena banyak orangtua yang tidak tahu siapa orang atau lembaga mana yang telah membawa anak-anak mereka. Anak-anak itu dikirimkan ke berbagai tempat di seluruh penjuru kepulauan. Seorang wakil dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Indonesia) memberitahu Komisi bahwa mereka telah menemukan banyak kasus anak-anak yang dibawa oleh orang-orang tidak dikenal dari kamp-kamp di Timor Barat ke Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Palembang (Sumatra Selatan), Denpasar (Bali) dan Sulawesi, dengan janji akan diberi beasiswa, yang kemudian terputus hubungan dengan orangtua mereka.³⁰¹

403. Beberapa kasus menunjukkan bahwa lembaga-lembaga itu dengan sengaja mencegah anak-anak untuk menghubungi orangtua mereka atau kembali ke Timor-Leste. Satu organisasi nonpemerintah yang bekerja di kamp-kamp Timor Barat untuk kepentingan Yayasan Hati melaporkan bahwa wakil-wakil Yayasan Hati dan satu organisasi nonpemerintah lainnya, Geni, pergi ke kamp-kamp dan meminta para orang tua untuk mengirimkan anak-anak mereka ke Jawa Tengah. Di kamp Noelbaki (Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia) dilaporkan bahwa salah satu dari wakil-wakil tersebut menjanjikan kepada para orangtua bahwa pemerintah akan membiayai pendidikan anak-anak mereka sampai ke tingkat universitas dan menempatkan mereka di asrama. Ia juga menjanjikan bahwa anak-anak akan mengunjungi orangtua mereka di kamp setelah tiga tahun. Tidak satu pun dari janji-janji ini disebutkan dalam perjanjian tertulis. Penghubung Yayasan Hati di kamp Tuapukan (Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia) dilaporkan mendesak para orangtua untuk tidak mengirimkan surat kepada anak-anak mereka di Jawa. Sebagian keluarga tidak mengetahui alamat anak-anak mereka.

404. Anak-anak itu dibawa ke Semarang dengan kapal. Organisasi Yayasan Sosial Soegijopranoto, bekerja sama dengan Keuskupan Semarang, memberikan mereka tempat tinggal untuk beberapa hari sebelum menyalurkan mereka ke sejumlah lembaga lokal. Di antara tempat-tempat lain, delapan anak dikirimkan ke Boro (Jawa Tengah), 84 ke Jimbaran (Denpasar, Bali), 21 ke Temanggung (Jawa Tengah), dan yang lainnya ke Wonosari.³⁰² Menurut Yayasan Hati, 164 anak dikirimkan ke Jawa dalam tiga kelompok pada November 1999, Desember 1999, dan Mei 2001.³⁰³

405. Ketua Yayasan Hati, Natercia Soares, mengatakan bahwa anak-anak ini adalah anak-anak Indonesia karena ia menganggap integrasi Timor-Leste dengan Indonesia masih sah. Ia mengatakan bahwa:

Sampai sekarang pemerintah belum mencabut UU No. 7/76 yang mengakui Timor Timur sebagai wilayah kedaulatan RI dan secara otomatis mengakui seluruh warga Timor Timur sebagai warga negara Indonesia.*³⁰⁴

* Pada 17 Juli 1976 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU No. 7/1976, menyatakan bahwa Timor Timur adalah provinsi ke-27 Indonesia. Undang-undang ini tidak pernah diakui oleh Persekutuan Bangsa-Bangsa. Pada 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1272 membentuk Pemerintah Transisi Persekutuan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (UNTAET), yang dengan demikian memisahkan Timor-Leste dan Indonesia dengan hukum internasional [lihat juga Bagian 2: Mandat Komisi].

406. Organisasi Al Anshar di Sulawesi Selatan juga menolak memulangkan anak-anak. Dalam perundingan-perundingannya dengan lembaga-lembaga dan para orangtua, lembaga ini terus-menerus mengubah sikapnya mengenai apakah dan dengan syarat apa mereka akan menyerahkan anak-anak itu. Kepulangan dua orang anak dari Al Anshar di Sulawesi memperoleh pemberitaan pers yang sangat kritis di Indonesia dan kepala lembaga ini menuduh UNHCR menculik anak-anak itu dan menuntut lebih daripada USD5.000 sebagai “kompensasi.”³⁰⁵

407. Pada November 1999, satu yayasan di Kalimantan Selatan, Yayasan Tunas Kalimantan, mengirimkan stafnya ke berbagai kamp pengungsi di Timor Barat dan menawarkan pendidikan di Banjar Baru. Sekitar 19 anak dibawa ke Kalimantan Selatan; tiga dari yang lebih tua berhasil kembali ke Atambua sendirian. Mereka melaporkan telah dipaksa mempelajari Islam, dan mengatakan bahwa tidak akan mendapat makanan jika menolak. Semua anak itu memiliki orangtua di Timor Barat atau di Timor-Leste. Seperti di Sulawesi, upaya-upaya untuk mengembalikan anak-anak kadang-kadang digagalkan oleh berubah-ubahnya tuntutan lembaga tersebut.³⁰⁶

408. Bahkan ketika anak-anak diberi pilihan apakah akan menetap di Indonesia atau tidak, keputusan mereka mungkin tidak dibuat secara bebas atau tidak mencerminkan keinginan mereka yang sebenarnya. Zacarias Pereira menyaksikan keadaan seperti itu di satu pesantren di Jawa Barat, di mana ia dikirimkan oleh Yayasan Lemorai pada 1999. Setelah tiga tahun, dan sepanjang waktu itu ia beragama Islam, Zacarias bisa menghubungi ayahnya melalui UNHCR. UNHCR membawa ayahnya ke pesantren tersebut untuk menjemputnya. Ia memaparkan kunjungan UNHCR:

Ayah saya datang ke Bandung dengan UNHCR tanggal 7-11 Oktober 2002...bersama dengan seorang polisi dan seorang pejabat pemerintah. Hasan Basri bertanya: “Siapa yang ingin kembali ke Timor?” Hanya dua anak yang mengangkat tangannya. Di sana ada seorang ibu dan salah satu dari tiga anaknya ingin pulang. Ibu ini, Domingas, adalah kakak dari istri Hasan Basri. Anak-anak yang lain tidak ada yang berani untuk mengangkat tangan. Tetapi kalau orangtua mereka datang untuk menjemput mereka, saya rasa mereka mau pergi.

Sebelumnya, Hasan Basri mengatakan kepada saya bahwa walaupun orangtua saya datang untuk menjemput saya, saya sekarang tidak perlu kembali ke Timor, lebih baik saya untuk menyelesaikan [sekolah] dulu. Tapi dia tidak bilang saya jangan pergi. Ketika mobil UNHCR pergi, satu anak lain, Abe dari Ossu [Viqueque], lari dan bersembunyi di jalan keluar. Dia memberhentikan mobil itu dan meminta mereka untuk membawanya pulang...Jadi akhirnya tiga anak yang pulang.³⁰⁷

409. Zacarias menetap di pesantren tersebut bersama dengan 20 anak Timor-Leste lainnya, banyak di antaranya yang berasal dari keluarga besar Basri. Beberapa dari mereka sudah kembali ke Timor-Leste dan beberapa masih di Jawa. Kisah Zacarias menunjukkan bahwa sementara anak-anak secara fisik tidak dilarang untuk pergi, mereka tidak diberi kesempatan untuk membuat keputusan secara pribadi. Kenyataan bahwa seorang anak bersembunyi di luar dan mendekati kendaraan UNHCR menunjukkan adanya tekanan yang kuat untuk tidak pulang.

410. Basri mengatakan kepada seorang wartawan pada September 2002:

*Apapun itu, meskipun mereka datang dengan tanda tangan atau foto orangtua, saya tidak akan menyerahkan mereka...saya tidak akan menyerahkan mereka. Tidak akan meskipun UNHCR datang bersama polisi. Saya tidak akan menyerahkan mereka.*³⁰⁸

Kondisi anak-anak yang tinggal di Indonesia

411. Keadaan yang dihadapi anak-anak dan kondisi yang mereka alami setelah mereka dikirimkan ke Indonesia berbeda-beda. Anak-anak dikirimkan ke seluruh wilayah di Indonesia, kadang-kadang sendirian dan kadang-kadang dalam kelompok. Sebagian anak dikirimkan ke lembaga negara atau swasta, sebagian ke sekolah atau universitas keagamaan, dan sebagian lagi diadopsi oleh keluarga-keluarga sebagai anak atau dijadikan pembantu. Walaupun begitu, ada sejumlah tema yang sama dalam kisah anak-anak itu mengenai pengalaman mereka.

Hilangnya identitas kebudayaan

412. Sebagian anak-anak yang diambil melaporkan kehilangan perasaan tentang identitas budaya mereka, dalam tingkatan yang berbeda-beda, dengan kehilangan bahasa, diberi nama lain, atau dipaksa untuk menganut agama lain. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang diambil ketika mereka masih bayi tidak pernah diberitahu bahwa mereka adalah orang Timor-Leste. Selama masa jabatannya sebagai Gubernur Timor Timur, Mário Viegas Carrascalão telah mengunjungi kurang lebih 45 anak Timor-Leste yang tinggal di dua lembaga di Bandung: Kinderdorf dan Panti Penyantunan Anak Taruna Negara (PPATN). Mayoritas berasal dari keluarga-keluarga Apodeti. Ia mendapati bahwa anak-anak itu dirawat dengan baik, tetapi jelas bahwa anak-anak itu tidak tahu samasekali mengenai kebudayaan dan bahasa mereka.³⁰⁹

413. Salah satu dari anak-anak itu ingat bahwa sebelum Mário Carrascalão mengunjungi mereka, mereka tidak pernah berbicara tentang Timor-Leste. Setelah kunjungan itu mereka mulai membicarakan mengenai keluarga dan asal mereka. Mário Carrascalão mengambil langkah untuk menyelenggarakan sejumlah kunjungan ke kampung halaman³¹⁰ dan akhirnya diselenggarakanlah satu kunjungan ke kampung halaman.

414. Dampak dari kunjungan ke kampung halaman ini diungkapkan oleh seorang anak laki-laki yang dibawa ke Panti Asuhan Seroja di Dili oleh sanak keluarganya ketika ia berumur lima tahun. Ia adalah salah satu dari 10 anak yang dikirimkan ke PPATN di Bandung pada 1979. Ia mengenang:

Di Bandung saya tinggal di lingkungan yang asing walaupun sebagian besar anak-anak Timor tinggal di satu gedung milik PPATN. Kami tidak pernah berbicara mengenai Timor, kami tidak bisa berbicara dengan bahasa Tetum dan kami tidak pernah mengirim surat ke Timor. Kami dibesarkan sebagai orang Sunda di Jawa. Saya tidak tahu mengapa saya di sana, hanya tahu bahwa ada perang di Timor.

Saya merasa senang mendapatkan pendidikan di Bandung tapi dalam hati saya merasa bahwa saya selalu bertanya-tanya siapa diri saya yang sebenarnya. Saya merasa sudah dicuci otak. Akhirnya saya berteman dengan anak-anak dari Timor, tapi saya merasa ketinggalan dan malu berada di sekitar mereka karena saya tidak bisa bahasa Tetum. sering saya harus meninggalkan ruangan, atau lebih sering lagi saya diam. Saya berusaha belajar bahasa dan kebudayaan saya.

Hidup tanpa keluarga saya juga sangat sedih bagi saya. Sangat sedih...bahkan sekarang jika saya melihat gambar seorang ibu sedang menggandeng anaknya, air mata menggenang di mata saya. Juga menyedihkan bahwa saya tidak akan pernah merasa dekat dengan keluarga saya.³¹¹

415. Setelah meninggalkan panti asuhan pada 1990, seorang anak perempuan mengunjungi Timor-Leste lagi pada 1995 dan 2003, tetapi mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri. Ia masih tinggal di Bandung bersama saudara laki-lakinya, meskipun tiga saudara yang lain yang pergi bersamanya pada 1976 telah pulang.³¹²

Penganiayaan

416. Komisi mendapatkan sejumlah laporan mengenai anak-anak yang dianiaya oleh orang-orang atau organisasi-organisasi yang mengasuh mereka. Beberapa anak, seperti Alfredo Alves atau Thomas da Costa melaporkan telah dipukuli hingga mereka melarikan diri dari rumah baru mereka. Dalam kasus-kasus lain penganiayaan berlangsung lebih halus.

417. Misalnya, anak-anak yang menjadi “Anak-anak Presiden” mengungkapkan tentang perasaan didiskriminasikan di panti asuhan anak yatim Katolik di Ungaran, tempat mereka tinggal. Walaupun mereka mengatakan mendapat perawatan yang cukup untuk tiga tahun pertama, mereka mulai merasa didiskriminasikan jika dibandingkan dengan anak-anak Indonesia di lembaga itu, yang banyak dari mereka membayar biaya yang besar di sana. Ketika beberapa anak Timor-Leste melarikan diri dan tidak ada reaksi, Petrus dan yang lainnya memprotes kepada Kantor Departemen Sosial setempat, namun tidak menghasilkan apa-apa. Menurut Petrus: “Saya merasa mereka menganggap kehidupan kami tidak ada harganya.

Seperti seekor binatang.”³¹³ Pada 1982, anak-anak itu “mogok” selama satu minggu memprotes diskriminasi. Sebagian anak kembali ke Timor-Leste pada 1994. Seorang mahasiswa filsafat yang kuliah di Yogyakarta mengunjungi Ungaran pada 1983 setelah mendengar cerita-cerita tentang protes anak-anak tersebut. Ia mendapati mereka sangat tidak puas dengan keadaan mereka, terutama dengan makanan yang tidak cukup dan bermutu rendah.³¹⁴

418. Menurut Sudirman, yang pernah menjadi bagian dari sekelompok anak yang dikirimkan ke satu pesantren di Makassar (Sulawesi Selatan), banyak anak di pesantren tersebut mengeluhkan tentang pengabaian, pemukulan, dan kerinduan pada rumah, serta ingin kembali ke keluarga di Timor-Leste. Ia juga ingat para orangtua yang datang mengunjungi anak mereka, tetapi dilarang membawa mereka pulang.³¹⁵

419. Dalam banyak kasus yang dilaporkan kepada Komisi, baik ada maupun tidak ada penganiayaan, janji-janji yang diberikan kepada anak-anak dan orangtua mereka tidak ditepati. Kesempatan pendidikan dan pekerjaan tidak terwujud. Anak-anak ditempatkan di lembaga-lembaga dan bukan bersama keluarga atau sebaliknya. Komunikasi antara anak-anak dan orangtua mereka terputus dan anak-anak tidak dikembalikan ke rumah sebagaimana yang telah disepakati.

Kisah Alfredo Reinado Alves

Setelah operasi, kami kembali ke Aileu dan batalion kami mulai mempersiapkan diri untuk pulang. Saya dan lima orang TBO lainnya... dibawa ke Taibessi di Dili. Kami tidak tahu mengapa kami dibawa ke sana. Suatu hari saya dengar komandan tentara mengatakan bahwa tentara tidak boleh membawa anak kecil ke Indonesia.

Setelah beberapa hari, tentara menyiapkan barangnya untuk pulang. C107 [anggota tentara yang dilayani Alfredo] bilang kepada saya, “Kau boleh ikut melihat pelabuhan tetapi sebaiknya kau masuk dalam kotak supaya tidak dilihat oleh polisi.” Saya merasa aneh tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai di pelabuhan saya merasa diangkat dan dimasukkan dalam kapal. Kemudian saya berusaha melihat ke luar, ternyata saya sudah berada di atas kapal. Teman lain juga ada di situ dalam kapal itu. Mereka mengatakan bahwa mereka juga disembunyikan di dalam kotak. Tidak lama kemudian tentara mengatakan harus sembunyi, polisi akan datang. Kemudian saya mendengar suara kapal berbunyi dan kapal mulai bergerak.

Setengah jam kemudian kami diperbolehkan keluar dari kotak. Kami lihat Dili semakin jauh, saya sangat sedih karena saya tidak pernah bertemu dengan mama sejak saya diambil [oleh tentara] dari halaman sekolah di Maubisse [Ainaro]. Hal ini terjadi sekitar Februari 1980 ketika saya berumur 13 tahun.

C107 membawa saya ke kampung orangtuanya di Lamikonga, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. Orangtua dan keluarga C107 memperlakukan saya seperti budak. Beberapa tahun kemudian C107 menikah dan dia pindah tempat. Saya tinggal dengan mereka. Istri C107 sangat baik terhadap saya tetapi C107 ingin kembalikan saya kepada orangtuanya.

Saya tidak mau tinggal dengan orangtua C107. Saya dengan teman saya dari Timor, Afonso, membuat rencana untuk melarikan diri... Rencana kami gagal, kami ditangkap di pelabuhan. C107 sangat marah dan pukul mata dan muka saya sampai bengkak. Saya kembali ke orangtua C107. Suatu malam saya main ke rumah teman dan tidak pulang tanpa izin. Sekali lagi saya kena pukulan C107. Malam itu juga saya berangkat dari rumah hanya dengan pakaian yang saya pakai menuju pelabuhan. Di pelabuhan saya mendapat kapal ke Samarinda, Kalimantan. Saya bertemu dengan seorang pekerja di kapal itu yang membayar tiket kapal untuk saya—mungkin orang kasihan pada saya karena muka saya masih bengkak. Akhirnya saya sampai di Samarinda. Ketika itu saya berumur sekitar 16 tahun.

Saya bekerja dan belajar di SMP selama hampir dua tahun. Kemudian saya dengar bahwa ada kapal dari Surabaya ke Timor-Leste. Suatu hari saya dengar bahwa ada kapal yang akan berangkat dari Kalimantan ke Surabaya. Saya tinggalkan pekerjaan dan pacar saya dan berangkat menuju Surabaya hanya dengan membawa uang yang saya terima untuk hari itu.

Ketika sampai di Surabaya saya mencari kapal ke Timor. Tiba-tiba saya ditangkap pegawai bea dan cukai. Empat hari kemudian saya menghubungi Panglima Kodam di Surabaya. Saya menunggu selama dua hari dan puji Tuhan permohonan saya diterima. Kepada Panglima saya menceritakan semua pengalaman saya. Panglima mau membantu dan memberi surat kepada saya. Saya bawa surat itu ke pelabuhan dan dengan surat itu saya diperlakukan dengan sangat baik.

Saya menumpang kapal ke Dili dan gembira sekali ketika tiba. Saya langsung berangkat ke Maubisse. Ketika saya ditanyai tentang surat jalan, saya menunjukkan surat dari Panglima Kodam. Aparat keamanan kaget melihat surat itu. Setelah sampai di Maubisse saya langsung menuju rumah mama saya. Tetapi tidak ada lagi orang yang tinggal di rumah itu. Saya menemui paman saya tetapi dia sudah lupa saya dan menjadi curiga. Tetapi akhirnya seorang teman bernama Tomás ingat saya. Saya sangat gembira dan akhirnya saya dibawa ke rumah mama saya yang ternyata masih hidup.

Beberapa lama kemudian, mama saya menyarankan agar saya mencari pekerjaan dengan seorang paman yang tinggal di Dili. Paman ini akhirnya memberi saya pekerjaan sebagai sopir truk. Tahun 1987 saya aktif menjadi anggota klandestin. Saya selalu suka naik kapal di pelabuhan. Lalu saya diberi tugas merusakkan sebuah kapal perang Indonesia. Pada 22 Juli 1995 saya menjadi kapten dan membawa 18 orang naik kapal melarikan diri ke Australia. Inilah satu-satunya kelompok “orang perahu” yang berhasil mencapai Australia. Kelompok berikutnya tertangkap dan sesudah itu tidak ada lagi.³¹⁶

Kesimpulan dan temuan

420. Pertarungan untuk menguasai Timor-Leste sebagian juga dilancarkan dalam pertempuran memperebutkan anak-anak. Anak-anak menjadi korban, pelaku, tenaga bantuan, dan saksi dalam konflik politik yang berkobar di Timor-Leste sejak 1974. Kewajiban semua pihak untuk menempatkan kepentingan terbaik anak-anak sebagai yang utama telah secara luas diabaikan.

421. Prinsip hukum internasional memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang timbul dari pengakuan atas kerentanan khusus anak-anak. Tanggung jawab semua pihak untuk memenuhi kewajiban mereka melindungi anak-anak sangat mendesak, terutama dalam periode konflik, pada saat ketimpangan perimbangan kekuatan antara anak-anak dan orang dewasa sangat mencolok. Komisi menemukan bahwa semua pihak yang terlibat konflik gagal memenuhi tanggung jawab mereka ini, akan tetapi bentuk pelanggaran yang paling keji dilakukan oleh Indonesia.

422. Indonesia, sebagai kekuasaan negara yang efektif di Timor-Leste, mempunyai kewajiban yang jelas untuk menghormati hak anak. Tanggung jawab ini timbul dari hukum humaniter internasional yang tercantum dalam Konvensi Jenewa IV. Selain kewajiban yang sifatnya khusus, Indonesia mempunyai kewajiban umum untuk melindungi anak-anak dan tidak membahayakan mereka dengan menempatkan mereka dalam keadaan yang berbahaya. Pihak Indonesia gagal memenuhi kewajiban ini, yang tampak paling jelas saat mereka memperlakukan anak-anak seperti hak milik yang bisa dikerahkan ke medan tempur dan saat memisahkan anak-anak dari keluarga mereka serta mengirimkannya ke Indonesia di mana identitas budaya mereka tidak diakui.

423. Sepanjang masa pendudukan, Indonesia juga terikat oleh standar-standar hak asasi manusia yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Standar-standar ini selalu dilanggar dengan bermacam-macam cara, termasuk merekrut anak-anak untuk membantu angkatan bersenjata, mengabaikan hak hidup anak-anak, kebebasan dan keselamatan diri pribadi, dan hak atas kebebasan hati nurani dan berpendapat. Bahkan setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990,

Indonesia gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang mengikatnya secara hukum. Secara umum, Indonesia tidak memenuhi kewajibannya untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak-anak ketika mengambil keputusan-keputusan yang ada kaitannya dengan anak-anak dan bila mungkin mempertimbangkan pendapat anak-anak (Pasal 3 [1]). Indonesia juga melanggar banyak dari kewajiban khusus yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan kewajiban mengenai kebebasan berpendapat dan memilih.

Anak-anak dalam konflik bersenjata dan gerakan klandestin

424. Anak-anak digunakan oleh semua pihak yang terlibat konflik politik di Timor-Leste dalam sepanjang periode mandat Komisi.

Anak-anak yang digunakan militer Indonesia sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO)

425. Komisi menemukan bahwa:

1. Militer Indonesia merekrut beberapa ribu anak sebagai TBO.
2. TBO direkrut dalam seluruh periode pendudukan tetapi angka perekrutan tertinggi terjadi dalam masa 1976-81 saat operasi militer mencapai puncaknya.
3. ABRI menggunakan berbagai cara untuk merekrut anak-anak sebagai TBO, mulai dari pemaksaan terang-terangan sampai tawaran pemberian sesuatu. Sebagian anak bergabung menjadi TBO secara sukarela. Tetapi dalam suasana yang mendesak pada waktu itu, batas antara perekrutan sukarela dan perekrutan paksa tidak pernah jelas.
4. Militer Indonesia cenderung menggunakan anak-anak sebagai TBO dan secara aktif merekrut anak-anak di bawah umur ketimbang orang dewasa.
5. Perekrutan anak-anak oleh anggota tentara secara perorangan diketahui pada tingkatan tertinggi struktur militer. Tidak ada upaya untuk mencegah hal ini; justru upaya-upaya untuk mengatur praktik tersebut menunjukkan bahwa hal ini justru direstui.
6. Meski diakui secara resmi, TBO bukan anggota angkatan bersenjata dan tidak mendapatkan imbalan seperti anggota tentara pada umumnya, seperti gaji, pangkat, atau seragam.
7. TBO anak-anak tidak menerima gaji dari militer Indonesia untuk jasa yang mereka berikan. Meskipun mereka sering menerima makanan dan tempat tinggal, itu bukanlah imbalan yang adil.
8. Tidak ada ketentuan mengenai perlakuan TBO anak-anak oleh prajurit perseorangan.
9. Hubungan antara TBO anak-anak dan prajurit yang mereka layani samasekali tidak seimbang. Dalam beberapa kasus, prajurit memperlakukan TBO seolah-olah mereka mempunyai hak milik atas anak-anak tersebut. Mereka

mengendalikan gerak-gerik, tugas, kondisi hidup, dan akhirnya hidup mati mereka. Kadang-kadang para prajurit ini masih menguasai TBO mereka meskipun tugas mereka sudah selesai; kadang-kadang mereka menyerahkan anak-anak ini kepada prajurit lain; kadang-kadang mereka ditinggalkan begitu saja.

10. TBO anak-anak melakukan tugas-tugas, yang walaupun tidak melibatkan mereka secara langsung dalam pertempuran tetapi menempatkan mereka dalam bahaya. Paling tidak, kondisi kerja mereka tidak sehat dan telah merusakkan kesempatan belajar mereka. Dalam banyak kasus, kerja yang dilaksanakan TBO anak-anak tidak sesuai dengan kemampuan fisik dan intelektual mereka.

11. Selain perekrutan mereka sebagai TBO, anak-anak juga ditugaskan bersama orang dewasa untuk operasi militer. Dalam kasus Operasi Kikis, Juli-September 1981, di beberapa tempat anak-anak berusia 10 tahun direkrut bersama beribu-ribu orang Timor-Leste untuk mengemping basis-basis Falintil.

426. Berdasarkan temuan-temuan di atas, Komisi yakin bahwa praktik tentara Indonesia menggunakan anak-anak TBO:

- Merupakan satu bentuk perbudakan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap larangan kebiasaan (*customary prohibition*) dasar atas perbudakan dan merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa (secara sengaja mengakibatkan kesengsaraan atau luka berat terhadap tubuh atau kesehatan: Konvensi Jenewa IV Pasal 147) dan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang.
- Merupakan satu bentuk kerja paksa yang melanggar Pasal 51 Konvensi Jenewa IV, yang mengharuskan bahwa, apabila Kekuasaan Pendudukan menggunakan tenaga penduduk sipil dari wilayah yang diduduki, Kekuasaan Pendudukan tersebut wajib membayar mereka dengan upah yang layak dan “pekerjaan yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan fisik dan intelektual.”

Anak-anak dalam Falintil dan gerakan klandestin

427. Komisi menemukan bahwa:

12. Anak-anak di bawah usia 15 tahun menjadi pejuang gerilya bersama Falintil, tetapi jumlahnya tidak banyak.

13. Tidak ada bukti bahwa anak-anak direkrut secara paksa oleh Falintil. Beberapa anak yang pernah direkrut oleh Falintil memberikan kesaksian bahwa mereka sangat berkeinginan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Timor-Leste; beberapa anak lain mengatakan bahwa upaya mereka untuk mendaftar ditolak karena mereka terlalu muda. Ini membedakan anak-anak yang menjadi anggota Falintil dengan tentara anak-anak di bagian-bagian lain dunia yang secara paksa direkrut karena kepatuhan dan kesediaan mereka untuk melakukan kekerasan.

14. Perekrutan anak-anak tampaknya bersifat *ad hoc*, informal, dan tidak dikendalikan dari pusat. Sebagian anak meninggalkan rumah mereka untuk bergabung, ada yang secara resmi “direkrut”, yang lainnya tinggal bersama masyarakat yang mengungsi ke hutan dan menjadi terlibat karena keberadaan mereka di sana.
 15. Perlakuan terhadap anak-anak yang direkrut umumnya baik; meskipun mereka menghadapi perlakuan keras yang sama dengan yang dihadapi orang lain yang direkrut. Kasus-kasus perlakuan kasar biasanya berkaitan dengan pelanggaran prosedur kedisiplinan, konflik dalam tubuh Fretilin, atau untuk mencegah penyerahan diri.
 16. Keterlibatan anak-anak ini bukannya tanpa biaya. Selain mereka bisa terbunuh dalam pertempuran, banyak dari orang muda ini juga mengalami kesulitan menyesuaikan diri setelah tugas mereka selesai, termasuk dijadikan sasaran sebagai pendukung kemerdekaan oleh pasukan keamanan Indonesia dan kesulitan menyesuaikan diri kembali pada kehidupan sipil setelah mereka dibebastugaskan.
428. Komisi yakin bahwa:
- Dengan menerima anak-anak di bawah 15 tahun sebagai pejuang gerilya, Falintil melanggar standar hukum humaniter internasional yang diuraikan dalam Protokol Opsional I tahun 1977 Konvensi Jenewa.
 - Perekrutan anak-anak berusia 15-17 tahun secara sukarela bukanlah suatu pelanggaran instrumen hak asasi manusia atau hukum humaniter.
429. Komisi menemukan bahwa:
17. Anak-anak merupakan bagian penting dari unsur klandestin dalam Resistansi terhadap Kekuasaan Pendudukan, baik sebagai *estafeta*, peserta demonstrasi, atau memberikan dukungan dalam bentuk lain.
 18. Pimpinan Resistansi merekrut anak-anak dan pemuda ke dalam gerakan klandestin tepat karena sumbangan unik yang bisa mereka berikan.
 19. Sangat sedikit bukti bahwa anak-anak terlibat kegiatan klandestin karena dipaksa. Justru pengalaman langsung menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia terhadap diri mereka maupun keluarga dekat mereka sering menjadi pendorong untuk bergabung dengan Resistansi. Sulit menilai sejauh mana keputusan mereka untuk bergabung dalam kegiatan klandestin merupakan keputusan yang diambil dengan penuh kesadaran. Namun demikian, anak-anak yang sudah cukup umur dan mencapai kematangan mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan bertindak sesuai dengan hati nurani mereka.
 20. Anak-anak Timor-Leste yang terlibat dalam gerakan klandestin berisiko besar mendapatkan hukuman dari militer Indonesia dan/atau kakitangannya. Banyak yang menderita karena keterlibatan mereka.

430. Komisi yakin bahwa:

- Meskipun perekrutan anak-anak dalam gerakan klandestin oleh pelaku non-negara bukan merupakan pelanggaran hukum internasional, hal ini bertentangan dengan standar hak asasi manusia yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus diutamakan.
- Tindakan militer Indonesia yang sangat keras terhadap anak-anak yang terlibat gerakan klandestin merupakan pelanggaran hak setiap orang untuk menikmati kebebasan hati nurani dan berpendapat, yang dalam hubungannya dengan anak-anak tertuang dalam Pasal 12 dan 13 Konvensi Hak Anak.

Anak-anak yang direkrut oleh milisi pro-otonomi pada 1999

431. Komisi menemukan bahwa:

21. Sejak akhir tahun 1998 anak-anak direkrut menjadi milisi yang meneror Timor-Leste.
22. Hampir semua anak yang direkrut dipaksa bergabung karena anak-anak tersebut atau keluarga mereka diintimidasi. Sebagian anak bergabung secara sukarela, biasanya karena mereka atau keluarga mereka adalah pendukung integrasi dan setuju dengan tujuan milisi.
23. Anggota milisi yang anak-anak terlibat dalam tindakan pelanggaran berat hak asasi manusia termasuk pembunuhan, penyerangan fisik, dan pemerkosaan serta dalam tindakan luas perusakan harta-benda.
24. Anak-anak ini hanya sesekali diberi imbalan berupa makanan atau sedikit uang.
25. Indonesia tidak melakukan apapun untuk melindungi anak-anak dari perekrutan paksa menjadi anggota kelompok-kelompok kriminal; kenyataannya, anggota-anggota militer sangat terlibat dalam kegiatan ini.
26. Praktik perekrutan paksa anak-anak untuk menjadi milisi tampaknya, sebagian, dirancang untuk memberikan kesan bahwa sangat banyak pemuda yang secara fanatik mendukung integrasi dan untuk menarik anak-anak muda ini ke dalam kegiatan-kegiatan kriminal yang menghancurkan hubungan keluarga dan kemasyarakatan yang menopang gerakan kemerdekaan.
27. Anak-anak yang direkrut biasanya berasal dari kalangan masyarakat Timor-Leste yang paling tidak beruntung, yang menjadi kejam karena partisipasi mereka dalam kekerasan dan karena menyaksikan kekerasan, dan mendapatkan stigma berada di pihak yang salah. Ada bukti yang menunjukkan bahwa dari semua anak yang direkrut oleh pihak-pihak yang terlibat konflik selama 25 tahun, anak-anak yang menjadi milisi kemungkinan adalah yang paling mengalami trauma akibat pengalaman mereka.
28. Komisi tidak menemukan bukti bahwa Indonesia telah mengambil langkah untuk mendukung pemulihan fisik dan psikologi serta reintegrasi sosial anak-anak ini.

432. Komisi yakin bahwa:

- Memaksa seorang anak untuk bergabung dalam milisi dan memaksanya untuk melakukan tindak kriminal, yang kadang-kadang korbannya adalah warga masyarakatnya sendiri, merupakan perlakuan tidak berperikemanusiaan dan/atau menyebabkan penderitaan besar atau luka yang berat terhadap tubuh dan kesehatan anak-anak yang bersangkutan. Ini adalah pelanggaran Pasal 147 Konvensi Jenewa IV dan hukum dan kebiasaan perang. Ini juga merupakan satu pelanggaran terhadap kewajiban hak asasi manusia Indonesia berdasarkan Pasal 38 Konvensi Hak Anak untuk menjamin penghormatan pada ketentuan-ketentuan khusus tentang anak dalam hukum humaniter internasional.
- Menggunakan anak-anak untuk mencapai tujuan politik merupakan suatu bentuk eksploitasi. Karena itu, Indonesia melanggar hak anak-anak tersebut untuk mendapat perlindungan dari eksploitasi agar kesejahteraan mereka terjamin—dan ini bertentangan dengan Pasal 36 Konvensi Hak Anak.
- Indonesia telah gagal memenuhi kewajibannya untuk mengambil semua langkah untuk memulihkan kesehatan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial anak-anak ini sesuai dengan Pasal 39 Konvensi Hak Anak.

Perlakuan tidak berperikemanusiaan terhadap anak-anak

Penahanan sewenang-wenang

433. Komisi menemukan bahwa:

29. Anak-anak menjadi korban penahanan sewenang-wenang hampir dalam seluruh masa mandat Komisi. Anggota UDT menahan anak sewenang-wenang selama periode konflik partai. Anggota Fretilin juga melakukan penahanan sewenang-wenang selama periode ini dan beberapa tahun setelah invasi Indonesia. Pasukan keamanan Indonesia melakukan penahanan sewenang-wenang terhadap anak-anak dalam skala yang jauh lebih besar. Perlakuan terhadap mereka selama dalam penahanan mengandung pelanggaran sistematis dalam seluruh 25 tahun periode pendudukan.
30. Selama masa pendudukan, aparat pemerintah Indonesia menahan anak secara sewenang-wenang dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang luas dan sistematis hak anak dalam tahanan. Dari 1975 sampai 1999 anak-anak diikat, dipukuli, ditendang, diperkosa, disetrum, disundut dengan rokok, direndam dalam air, dimasukkan dalam sel gelap, diancam dibunuh, dan diteror oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia. Sejumlah anak meninggal karena perlakuan ini. Komisi tidak menemukan kasus pelaku pelanggaran ini diberi hukuman atau dikenai tindakan disipliner.
31. Pada tahun-tahun awal setelah invasi, anak-anak ditahan dalam skala besar setelah mereka ditangkap atau menyerah dan mereka dikirim ke “kamp pemukiman.” Makanan, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan yang mereka terima sangat tidak memadai dan mereka tidak bisa bergerak

bebas dan hal ini membatasi kemampuan mereka dan keluarga mereka untuk mendapatkan makanan yang diperlukan untuk menambah jatah yang mereka terima yang jumlahnya sedikit. Anak-anak kadang-kadang juga ditahan di tempat penahanan resmi dan fasilitas militer setelah mereka menyerah atau tertangkap. Anak-anak juga merupakan bagian yang cukup besar dari orang-orang yang ditahan di Pulau Ataúro antara 1980 dan 1986, baik bersama anggota keluarga mereka atau terpisah dari mereka. Beberapa ribu anak meninggal dunia karena kondisi yang sangat keras di kamp-kamp pemukiman di Ataúro.

32. Sebab penahanan anak-anak oleh militer Indonesia serupa dengan penahanan orang dewasa: keterlibatan mereka dalam kegiatan klandestin, untuk mematahkan dukungan kepada anggota Falintil, dan untuk mendapatkan informasi mengenai Falintil atau gerakan klandestin. Anak-anak juga ditahan karena kegiatan orangtua mereka atau anggota keluarga yang lain.
33. Mahasiswa dan anak-anak sekolah menjadi sasaran penangkapan dan penahanan ketika demonstrasi terbuka mulai diselenggarakan pada dasawarsa 1990-an. Pihak berwenang Indonesia menahan anak-anak pada saat dan sesudah terjadinya demonstrasi dan kadang-kadang untuk mencegah terjadinya demonstrasi. Banyak tahanan anak yang menjadi sasaran pelanggaran, termasuk penyiksaan. Anak-anak juga ditangkap dan ditahan oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia dan milisi kakitangan mereka selama kekerasan yang terjadi di seputar Jajak Pendapat 1999. Kadang-kadang penahanan ini dipergunakan untuk memaksa anak-anak bergabung dalam milisi.
34. Setelah gerakan bersenjata UDT 11 Agustus 1975, anak-anak ada di antara orang-orang yang ditawan UDT di tempat-tempat yang dikhususkan untuk tujuan itu. Komisi tidak mendapatkan bukti tentang penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya yang dilakukan oleh UDT terhadap tahanan anak-anak.
35. Selama masa konflik partai, anak-anak termasuk dalam kelompok orang yang ditahan sewenang-wenang oleh anggota-anggota Fretilin, karena mereka atau anggota keluarga mereka diyakini berafiliasi dengan partai politik lawan. Penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap tahanan anak-anak dilakukan oleh Fretilin, tetapi tidak meluas atau dilakukan secara sistematis.
36. Setelah invasi Indonesia, Fretilin melakukan penahanan anak-anak secara sewenang-wenang, tetapi kebanyakan karena bersamaan dengan penahanan orang dewasa. Meskipun demikian, ada juga kasus anak-anak yang ditangkap sebagai pengganti sanak-saudara yang menjadi anggota partai lain yang berada di wilayah yang tidak dikuasai oleh Fretilin dan yang ditangkap karena tuduhan melanggar disiplin. Meskipun terbukti bahwa ada “surat penangkapan” dalam beberapa kasus, penangkapan, penyiksaan, pengabaian proses hukum, dan penggunaan anak sebagai sandera yang sering terjadi selanjutnya, tidak mempunyai dasar hukum.

434. Komisi yakin bahwa:

- Penahanan anak-anak oleh anggota pasukan keamanan Indonesia melibatkan pelanggaran berganda dan berulang terhadap hukum Indonesia, standar hak asasi manusia, dan hukum internasional. Penangkapan biasanya dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai wewenang resmi untuk melakukan penangkapan menurut hukum Indonesia.
- Penyiksaan dan perlakuan tidak layak yang luas yang menyebabkan penderitaan besar atau luka yang berat terhadap tubuh maupun kesehatan merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa IV (Pasal 147) yang berlaku untuk Indonesia sebagai hukum kebiasaan dan hukum perjanjian.
- Tidak memberikan makanan dan obat-obatan yang memadai kepada anak-anak yang ditahan merupakan pelanggaran Pasal 55 Konvensi Jenewa IV.
- Tidak memperbolehkan pengiriman yang bebas bahan makanan, obat-obatan, dan pakaian yang ditujukan kepada anak-anak di bawah 15 tahun merupakan pelanggaran Pasal 23 Konvensi Jenewa IV.
- Tidak memberi penjelasan kepada tahanan anak-anak tentang hak dan sebab penahanan mereka merupakan pelanggaran Pasal 71 Konvensi Jenewa IV.
- Indonesia melanggar kewajiban khususnya menurut Konvensi Hak Anak, yang diratifikasinya pada 1990, terutama Pasal 37, yang menetapkan kewajiban untuk menjamin agar tidak seorang anakpun direngguk kebebasannya secara tidak sah dan agar penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan anak harus sesuai dengan hukum serta hanya dilakukan sebagai tindakan terakhir dan hanya untuk jangka waktu sependek mungkin.
- Tindakan anggota-anggota UDT dan Fretilin dalam masa konflik partai melanggar standar hak asasi manusia, hukum Portugis yang berlaku, dan hukum internasional. Menurut hukum Portugis, tidak ada satu anggota dari partai manapun yang mempunyai kewenangan hukum untuk menangkap, menahan, menyerang, atau memperlakukan seseorang secara tidak layak.
- Anggota-anggota kedua partai melalaikan kewajiban mereka berdasarkan Pasal 3 Konvensi-Konvensi Jenewa, yang melarang kekerasan terhadap kehidupan dan manusia dan pelecehan terhadap martabat pribadi, seperti perlakuan yang menghinakan atau merendahkan orang dan mengambil sandera.
- Penyiksaan, penahanan secara tidak sah, dan penggunaan anak-anak sebagai sandera oleh Fretilin dalam periode setelah invasi Indonesia merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa IV.

Pembunuhan sewenang-wenang terhadap anak-anak

435. Komisi menemukan bahwa:

37. Kegagalan semua pihak untuk membedakan orang sipil dari petempur juga meluas pada anak-anak. Anak-anak umumnya dibunuh karena sebab yang sama dengan orang dewasa dan sering dibunuh bersama orang dewasa.

Oleh karena itu, tidak cukup bukti untuk menyebutkan bahwa anak-anak secara khusus dijadikan sasaran. Pada saat yang sama, anak-anak juga tidak mendapat perlindungan atau diperlakukan secara khusus dalam kekerasan yang terjadi selama konflik politik.

38. Anak-anak dibunuh dalam konteks yang berbeda-beda, termasuk dalam konflik bersenjata terbuka, dalam pembantaian massal, dalam tahanan, dan dalam eksekusi cepat. Pada tahun-tahun awal konflik banyak anak terbunuh bersama keluarga mereka dalam operasi militer atau saat mereka terperangkap di wilayah yang diperebutkan. Pada tahun-tahun belakangan, korban di bawah umur cenderung remaja yang menjadi sasaran karena dicurigai terlibat kegiatan prokemerdekaan.
 39. Dalam periode konflik bersenjata internal, anak-anak dibunuh oleh Fretilin dan UDT. Mereka dibunuh dalam tahanan, karena afiliasi politik mereka sendiri atau afiliasi politik keluarga mereka. Kebanyakan mereka dibunuh dalam kelompok, bukannya sendiri-sendiri dan bersama anggota keluarga mereka.
 40. Angkatan bersenjata dan agen-agen Indonesia membunuh anak-anak selama periode 1975-79 sebagai bagian dari kampanye lebih luas Indonesia untuk menguasai Timor-Leste. Indonesia tidak membedakan anak-anak dengan orang dewasa. Anak-anak yang sedang keluar mencari makan, baik sendiri maupun bersama orang dewasa, berisiko ditembak oleh anggota-anggota ABRI atau Hansip. Kelompok-kelompok orang sipil tidak bersenjata, termasuk anak-anak, yang tinggal di luar kamp pemukiman yang dikontrol Indonesia bisa saja dieksekusi secara acak.
 41. Sejak 1980, anak-anak dibunuh ketika ABRI melakukan pembalasan secara besar-besaran dan tanpa pandang bulu sebagai balasan atas serangan-serangan pejuang Resistansi. Anak-anak termasuk yang menjadi korban terbunuh dalam penumpasan besar-besaran yang terjadi setelah penyerangan oleh Falintil terhadap Dili pada Juni 1980, terhadap Koramil Mau Chiga pada Agustus 1982, dan terhadap kesatuan Zeni di Kraras pada Agustus 1983. Dalam kasus-kasus tersebut, anak-anak dibunuh dalam penyerangan membabitkan terhadap kelompok-kelompok penduduk sipil dan karena mereka sendiri dicurigai memberikan dukungan kepada Falintil.
 42. Pada 1999, anak-anak dibunuh dalam operasi-operasi pencarian anggota klandestin atau Falintil, dalam penyerangan milisi untuk menghukum kampung-kampung yang mendukung atau membantu Resistansi, atau sebagai bagian pembunuhan massal setelah pengumuman hasil pemungutan suara atau saat keluar mencari makan. Anak-anak menjadi sasaran yang mudah saat terjadi penyerangan di tempat-tempat penampungan pengungsi. Menurut laporan, pelakunya adalah anggota milisi yang terkait dengan militer Indonesia atau anggota TNI sendiri.
436. Komisi yakin bahwa:
- Pembunuhan anak-anak merupakan pelanggaran hak mereka untuk hidup, yang merupakan salah satu hak asasi manusia paling dasar. Dalam banyak

kasus, mereka mati akibat tindakan di luar hukum yang bisa dianggap sebagai tindak kejahatan perang, yang merupakan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang atau pelanggaran berat Konvensi-Konvensi Jenewa 1949.

- Pembunuhan anak-anak oleh UDT dan Fretilin merupakan pelanggaran terhadap hukum Portugal, yang tidak memberikan wewenang kepada partai manapun, sebagai pelaku non-negara, untuk mencabut nyawa orang, apalagi anak-anak, dalam keadaan apapun.
- Pembunuhan anak-anak sipil dalam periode konflik internal bersenjata merupakan pelanggaran Pasal Bersama 3 Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949, yang secara jelas melarang pihak-pihak untuk membunuh orang yang tidak ambil bagian aktif dalam permusuhan.
- Setelah konflik internal berubah menjadi konflik internasional, ketentuan-ketentuan yang mengatur konflik bersenjata internasional berlaku di Timor-Leste untuk mengatur perilaku UDT, Fretilin, dan Indonesia. Perlindungan yang diberikan kepada anak-anak berdasarkan Hukum Internasional mengenai Konflik Bersenjata lebih luas, namun perlindungan untuk mereka dalam kaitannya dengan hak untuk hidup sama dengan perlindungan untuk orang sipil dewasa.
- Pembunuhan anak-anak sipil oleh militer Indonesia atau kakitangannya selama periode konflik bersenjata internasional merupakan tindak kejahatan perang menurut hukum dan kebiasaan perang serta Konvensi Jenewa IV.
- Anak-anak yang dibunuh karena hubungan mereka dengan gerakan klandestin atau dalam tindakan pencarian pejuang Resistansi juga merupakan penduduk sipil tidak bersenjata yang tidak terlibat konflik militer. Pembunuhan semacam itu dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan perang biasa, yang melanggar hukum dan kebiasaan perang serta Konvensi Jenewa IV.

Kekerasan seksual terhadap anak-anak

437. Komisi menemukan bahwa:

43. Pasukan keamanan Indonesia, orang Timor-Leste kakitangan mereka, dan orang lainnya yang mempunyai wewenang telah menggunakan kekerasan seksual terhadap anak-anak secara strategis maupun untuk memanfaatkan kesempatan, dalam sepanjang masa pendudukan.
44. Kekerasan seksual strategis digunakan untuk menegakkan kontrol melalui teror, baik sebagai bentuk hukuman terhadap korban, sebagai upaya untuk mendapatkan informasi, atau untuk tujuan lebih luas merusak hubungan keluarga.
45. Skala kekerasan seksual memanfaatkan kesempatan mencerminkan suatu suasana impunitas yang meluas dari pejabat tinggi militer sampai orang Timor-Leste kakitangan mereka dan orang sipil yang mempunyai kedudukan berwenang.

46. Kekerasan seksual terhadap anak perempuan tampaknya sering didorong oleh keinginan untuk menghukum anggota keluarga yang terlibat dalam kegiatan perlawanan.
 47. Anak perempuan maupun perempuan dewasa menjadi sasaran kekerasan seksual yang sama selama periode mandat Komisi. Kedua golongan itu sangat berisiko terutama di kamp pemukiman atau ketika ditahan oleh pihak berwenang Indonesia.
 48. Setelah terjadi pelanggaran seksual, anak-anak perempuan menjadi rentan terhadap eksploitasi berkepanjangan, yang mengarah pada perbudakan seksual untuk waktu yang lama atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual yang berulang.
 49. Praktik kekerasan seksual terhadap anak-anak, dalam banyak kasus, dilakukan secara terbuka tanpa takut akan adanya sanksi baik oleh anggota militer berpangkat rendah maupun perwira atasan mereka, serta orang-orang yang mempunyai wewenang sipil seperti kepala desa, polisi, dan guru.
 50. Kebanyakan kasus kekerasan seksual yang dipelajari oleh Komisi terjadi di dalam tahanan militer atau di kompleks militer atau tempat-tempat lain yang bisa dianggap resmi.
 51. Meskipun pejabat senior pemerintah sipil Indonesia jelas mengetahui bahwa tindakan-tindakan tersebut melanggar hukum, Komisi menemukan bahwa hanya ada satu kasus seorang pegawai pemerintah dihukum atas tindakannya. Penting dicatat bahwa kasus ini melibatkan seorang anggota Hansip berpangkat rendah.
438. Komisi yakin bahwa:
- Berdasarkan sifat kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak dan impunitas yang dinikmati para pelaku, bisa disimpulkan bahwa di Timor-Leste ada suatu keadaan di mana kekerasan seksual diperbolehkan, bahkan dianjurkan.
 - Pemerksaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual berat adalah penyerangan yang menghancurkan keamanan seseorang; tindakan-tindakan tersebut juga merupakan perlakuan keji yang tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat, yang dalam keadaan tertentu bisa digolongkan sebagai penyiksaan. Kejahatan-kejahatan yang mengerikan ini diperparah ketika dilakukan terhadap anak-anak, yang karena kerentanannya membutuhkan perlindungan khusus. Prinsip-prinsip ini secara universal tercantum dalam hukum internasional serta hukum Indonesia (KUHP Bab XIV).
 - Beberapa kasus kekerasan seksual yang diteliti oleh Komisi merupakan perlakuan kasar yang tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat, atau penyiksaan. Penyiksaan dalam keadaan yang telah dijelaskan di atas merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa dan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, serta pelanggaran terhadap larangan penyiksaan.

- Dalam keadaan Timor-Leste yang diinvasi dan diduduki, banyak tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak, termasuk pemerkosaan, merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa (Pasal 147 Konvensi Jenewa IV untuk orang sipil) karena menyebabkan penderitaan besar atau luka berat pada tubuh maupun kesehatan, atau karena merupakan tindakan tidak berperikemanusiaan.
- Tindakan-tindakan ini merupakan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, karena memperlakukan orang sipil secara tidak layak dan penghinaan terhadap martabat dan kehormatan pribadi (Pasal Bersama 3 dan Pasal 76 [1] dari Peraturan Tambahan Konvensi Den Haag IV).
- Perbudakan seksual dan praktik-praktik menyerupai perbudakan lainnya, seperti pemaksaan memberikan pelayanan seksual, yang dilakukan terhadap anak-anak sipil, merupakan pelanggaran Pasal 27 Konvensi Jenewa IV dan merupakan pelanggaran berat terhadap konvensi ini (Pasal 147). Praktik-praktik ini melibatkan pelanggaran berganda standar-standar hak asasi manusia yang mencakup pengurungan secara tidak sah, menimbulkan penderitaan besar atau luka berat terhadap tubuh maupun kesehatan, penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan.
- Karena hampir semua tindak kekerasan seksual yang diteliti oleh Komisi dilakukan oleh pejabat atau petugas-petugas Kekuasaan Pendudukan, Indonesia bertanggung jawab atas penderitaan yang mereka alami (Pasal 29 dan 32, Konvensi Jenewa IV).
- Indonesia gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan kebiasaan dan perjanjian seperti menurut Konvensi Jenewa untuk melindungi anak-anak sipil dari kekerasan seksual dan melakukan tindakan-tindakan untuk menyelidiki, mengajukan ke pengadilan, dan menghukum para pelaku perseorangan pelanggaran berat (Pasal 146, Konvensi Jenewa IV).
- Setelah September 1990, Indonesia gagal memenuhi kewajibannya menurut Konvensi Hak Anak untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan penganaiayaan seksual (Pasal 34).
- Setelah September 1990, Indonesia gagal memenuhi kewajibannya menurut Konvensi Hak Anak untuk membantu pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial anak-anak korban kekerasan seksual (Pasal 39).

Pemindahan anak-anak ke Indonesia

439. Komisi menemukan bahwa:

52. Anak-anak Timor-Leste banyak dipindahkan dari keluarga mereka dan dari tanah-air mereka ke Indonesia sepanjang masa pendudukan.
53. Pemindahan anak-anak ke Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penculikan oleh prajurit secara perorangan sampai melalui program pendidikan yang dibiayai pemerintah.

54. Walaupun tingkat pemaksaan yang dilakukan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga untuk memindahkan anak berbeda-beda, hampir selalu ada unsur paksaan dan kadang-kadang ada pula penggunaan kekerasan secara terbuka.
55. Pada tahun-tahun awal pendudukan, prajurit-prajurit reguler adalah pelaku utama pemindahan anak-anak Timor-Leste. Seperti dalam kasus TBO anak-anak (yang sebagian dibawa ke Indonesia oleh prajurit yang mereka layani pada akhir masa tugas sang prajurit), anak-anak yang dibawa ke Indonesia banyak diperlakukan sebagai barang milik yang bisa dipindah paksa, dikemas dalam kotak, dan diharuskan melakukan kerja kasar untuk keluarga di mana mereka tinggal.
56. Lembaga-lembaga, termasuk rumah sakit dan Panti Asuhan Seroja, membantu proses pemindahan anak-anak oleh prajurit tentara Indonesia. Meskipun petugas-petugasnya secara pribadi menyatakan kepada Komisi bahwa mereka mengkhawatirkan prosesnya, tidak ada bukti bahwa lembaga-lembaga ini menolak ambil bagian.
57. Lembaga-lembaga keagamaan juga terlibat secara langsung dalam pemindahan anak keluar Timor-Leste. Meskipun Komisi mengakui bahwa pemindahan-pemindahan ini dianggap sebagai kegiatan amal oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan, tetapi jelas bahwa anak-anak tersebut serta orangtua mereka tidak diberi cukup informasi.
58. Upaya-upaya untuk mengatur praktik ini baru dilakukan pada awal dasawarsa 1980-an tetapi Komisi mempunyai sedikit bukti bahwa peraturan diikuti atau bahwa ada pengawasan mengenai pelaksanaannya. Bila orangtua dari sang anak dimintai persetujuan, mereka kebanyakan tidak diberi informasi yang lengkap atau bahkan dibohongi. Lebih jauh, ada kasus-kasus “persetujuan” paksa yang diberikan di bawah ancaman kekerasan.
59. Anak-anak Timor-Leste yang dibawa ke Indonesia pada usia muda mengalami kehilangan identitas budaya mereka, yang menimbulkan penderitaan besar pada anak-anak dan keluarga mereka. Dalam banyak kasus, hal ini merupakan akibat dari kebijakan lembaga keagamaan yang terlibat, keputusan orang yang dipercaya untuk menjaga anak-anak itu, atau semata-mata akibat dari tercerabutnya anak-anak itu dari akar budaya mereka karena jarak yang jauh dari tanah asal mereka.
60. Komisi tidak pernah mendapatkan keterangan tentang adanya upaya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Timor-Leste oleh orang-orang dari kebangsaan, bahasa, atau agama yang sama. Sebaliknya, Komisi menemukan banyak kasus di mana dilakukan upaya terang-terangan untuk mengubah agama anak-anak atau cara-cara lain untuk menjadikan mereka lebih Indonesia.
61. Tidak ada bukti yang cukup untuk menentukan apakah pemindahan besar-besaran anak-anak Timor-Leste merupakan kebijakan resmi pemerintah Indonesia atau kebijakan militer Indonesia. Akan tetapi ada bukti cukup

yang jelas tentang keterlibatan pejabat tinggi dalam beberapa kasus, termasuk keterlibatan Presiden Soeharto dan keluarganya.

62. Pemerintah Indonesia tidak benar-benar mengupayakan pengaturan praktik-praktik pemindahan anak-anak dengan melembagakan kebijakan adopsi di bawah tanggung jawab badan yang berwenang sesuai hukum yang berlaku.
 63. Hanya ada sedikit bukti bahwa pemerintah Indonesia melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajibannya sesuai hukum internasional mengenai pemeliharaan anak-anak Timor-Leste oleh orang-orang yang bukan anggota keluarga mereka atau di lembaga-lembaga, mengenai pemindahan mereka ke Indonesia, ataupun mengenai kondisi pemeliharaan mereka.
 64. Menurunnya jumlah anak-anak yang diculik setelah 1981 tampaknya berkaitan dengan perubahan situasi militer dan normalisasi pendudukan dan bukan karena efektivitas tindakan-tindakan yang dijalankan oleh pihak berwenang Indonesia.
 65. Komisi menemukan bahwa program-program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Tenaga Kerja yang mengirimkan anak-anak Timor-Leste ke Indonesia untuk belajar atau bekerja dilandasi oleh motivasi politik dan keamanan. Motivasi ini mencakup penumbuhan komitmen pada integrasi dengan Indonesia dan untuk mengeluarkan calon pembuat kerusuhan dari Timor-Leste.
 66. Bahkan jika pemindahan tersebut dilandasi sebagian oleh pertimbangan kemanusiaan atau jika ada persetujuan orangtua, tidak banyak upaya dilakukan untuk menjamin anak-anak bisa menghubungi keluarga mereka atau untuk menjamin agar anak-anak mempunyai kebebasan memilih tetap tinggal di Indonesia atau pulang ke Timor-Leste. Komisi menerima banyak laporan mengenai anak-anak yang dipindahkan dan tidak pernah bertemu keluarga mereka lagi, serta orang-orang yang dipindahkan sewaktu masih kecil dan kembali setelah dewasa tidak bisa menemukan keluarga bahkan distrik asal mereka. Kesaksian-kesaksian yang diberikan kepada Komisi mengungkapkan bahwa orangtua yang berusaha menelusuri keberadaan anak mereka sering dihalang-halangi oleh pejabat Indonesia.
440. Komisi yakin bahwa:
- Penculikan anak-anak Timor-Leste oleh anggota tentara merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia (KUHAP Bab XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang), serta melalaikan kewajiban Kekuasaan Pendudukan untuk menghormati hak keluarga dan untuk tidak mengintimidasi orang sipil (Pasal 27 dan 23 Konvensi Jenewa IV).
 - Pemisahan seorang anak dari identitas, budaya, etnisitas, agama, atau bahasanya merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa IV karena hal ini merupakan perlakuan tidak berperikemanusiaan atau menyebabkan penderitaan besar bagi anak-anak.

- Pemaksaan budaya asing adalah pelanggaran hukum hak asasi manusia yang mewajibkan pemerintah Indonesia menghargai hak anak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama.
- Kegagalan pemerintah Indonesia untuk menjamin agar status pribadi anak-anak tidak diubah oleh para prajuritnya atau lembaga-lembaganya merupakan pelanggaran kewajibannya menurut Konvensi Jenewa IV (Pasal 50).
- Kegagalan Indonesia untuk menjamin diberikannya pendidikan, sebanyak mungkin, oleh orang-orang yang berasal dari kebangsaan, bahasa, dan agama yang sama merupakan pelanggaran Konvensi Jenewa IV (Pasal 50).
- Kegagalan Indonesia untuk mengatur dengan memadai praktik pemindahan anak-anak merupakan pelanggaran terhadap kewajibannya menurut Pasal 21 Konvensi Jenewa IV.
- Kegagalan Indonesia untuk mencegah pemindahan secara tidak sah anak-anak Timor-Leste keluar merupakan satu pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa IV (Pasal 11) dan kegagalannya untuk mencegah penculikan, penjualan, atau perdagangan anak merupakan satu pelanggaran terhadap kewajibannya menurut Pasal 29.
- Indonesia tidak melakukan tindakan yang memadai sebagai Kekuasaan Pendudukan untuk memenuhi kewajibannya kepada anak-anak Timor-Leste sesuai Konvensi Jenewa IV untuk mengungsikan anak-anak dari wilayah konflik (Pasal 17), mengambil segala langkah yang diperlukan untuk menjamin anggota-anggota dari keluarga yang sama tidak terpisah (Pasal 49), menjamin anak-anak dipersatukan kembali dengan keluarga mereka atau ditempatkan pada keluarga atau teman, atau menjamin anak-anak tersebut diidentifikasi dan keluarga mereka didaftar (Pasal 50). Tidak ada upaya untuk menjamin bahwa penempatan anak-anak di lembaga adalah tindakan yang terakhir. Kegagalan untuk mempertemukan keluarga yang terpisah setelah 1990 merupakan satu pelanggaran terhadap Konvensi Hak Anak.
- Memaksa para pelajar dari Timor-Leste untuk bersumpah menerima integrasi dengan Indonesia melanggar Pasal 45 Peraturan Tambahan Konvensi Den Haag IV yang melarang membuat penduduk suatu wilayah pendudukan untuk menyatakan sumpah kesetiaan kepada Kekuasaan Pendudukan.
- Tindakan Indonesia memaksa semua orang di bawah usia 18 tahun untuk bekerja, atau memaksa penduduk sipil dari wilayah pendudukan untuk bekerja di luar wilayah pendudukan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum (Pasal 51, Konvensi Jenewa IV).

Catatan akhir

1. *International Convention Concerning the Laws and Customs of War on Land* [Konvensi Internasional Mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat], dibuka untuk penandatanganan pada 18 Oktober 1907 (mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1910), Pasal 23 (H) dari Peraturan Tambahan Konvensi Den Haag IV; lihat pula [*Fourth*] *Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* [Konvensi Jenewa (Keempat) Yang Berkaitan dengan Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang], dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 12 Agustus 1949, UNTS 75, halaman 287 (mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 1950). Pasal 51 (Bagian III Wilayah Pendudukan) dari Konvensi Jenewa IV.
2. *Konvensi Jenewa IV*, 1949, Pasal 147.
3. *Konvensi Jenewa IV*, 1949, Pasal 17.
4. *Konvensi Jenewa IV*, 1949, Pasal 49.
5. *Konvensi Jenewa IV*, 1949, Pasal 24 dan 50.
6. *Konvensi Jenewa IV*, 1949, Pasal 50.
7. *Konvensi Jenewa IV*, 1949, Pasal 50.
8. *Konvensi Jenewa IV*, 1949, Pasal 50.
9. *Convention on the Rights of the Child* [Konvensi Hak Anak], dibuka untuk penandatanganan pada 20 November 1989, UNTS 1577, halaman 3 (mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990), Pasal 3(1).
10. *Konvensi Hak Anak* 1989, Pasal 19, 34, dan 36.
11. *Konvensi Hak Anak* 1989, Pasal 27.
12. *Konvensi Hak Anak* 1989, Pasal 21.
13. *Konvensi Hak Anak* 1989, Pasal 11 dan 35.
14. *Konvensi Hak Anak* 1989, Pasal 20.
15. *Konvensi Hak Anak* 1989, Pasal 39.
16. *Konvensi Hak Anak* 1989, Pasal 38(2) dan (3).
17. *Konvensi Hak Anak* 1989, Pasal 38(3).
18. *Konvensi Hak Anak* 1989, Pasal 32; lihat juga *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* [Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya], dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 19 Desember 1966, UNTS 993, halaman 3 (berlaku mulai tanggal 3 Januari 1976), Pasal 10(3).
19. Lihat misalnya CAVR, Profil Komunitas Lalawa, Iliomar, Lautém, 29 Mei 2003; Alawa Kraik, Bagaüa, Baucau, 6 Oktober 2003.
20. Belchior Francisco Bento Alves Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
21. Wawancara CAVR dengan Bonifacio dos Reis, Hatulia, Ermera, 13 Agustus 2003.
22. Pernyataan HRVD 05646.
23. Wawancara CAVR dengan Francisco Soares, Laleia, Manatuto, 26 Juni 2003; wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2004.
24. ABRI, "Petunjuk Teknis tentang Kegiatan Babinsa," Juknis/06/IV/1982 (Korem 164, Wira Dharma, Seksi Intelijen, Williem da Costa [Kepala Seksi Intelijen]), terjemahkan bahasa Inggris ada dalam Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984, halaman 226-227.
25. ABRI, "Tentang Perlawanan Rakyat Terlatih" [Dokumen Rahasia Instruksi Operasi], No: INSOP/03/II/1982.
26. Pernyataan HRVD 09081.
27. Wawancara CAVR dengan António da Costa, Dili, 4 Januari 2004.
28. Pernyataan HRVD 08366.
29. Pernyataan HRVD 03819; 03879.
30. Wawancara CAVR dengan Marcos Loina da Costa, Laleia, Manatuto, 24 Juni 2003.
31. Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2004.
32. Wawancara CAVR dengan Alfredo Reinado Alves, Dili, 5 Maret 2004.
33. Wawancara CAVR dengan Francisco da Silva Guterres, Dili, 4 Juni 2004.
34. Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2003.

35. ABRI, "Tentang Perlawanan Rakyat Terlatih," No: *INSOP/03/II/1982*, halaman 7.
36. Geoffrey Robinson, "People's War: Militias in East Timor and Indonesia," *South East Asia Research*, Vol 9, No. 3, 2001, halaman 292; Doug Kammen, Gerry van Klinken, *Masters of Terror*; Eurico Guterres, *Melintas Badai Politik Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, halaman 41-42.
37. Wawancara CAVR dengan Pastor Elisio Locateli, Fatumaca, Baucau, 8 April 2003.
38. Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2004.
39. ABRI, "Tentang Perlawanan Rakyat Terlatih," No: *INSOP 03/II/1982*, halaman 7.
40. ABRI, Prosedur Tetap (Protap) mengenai Intelijen, No. 01/IV/1982 (Komandan A. Sahala Rajagukguk), Dili. Diterjemahkan dalam Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, halaman 227.
41. ABRI, *Juknis/06/IV/1982*.
42. Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2003.
43. Wawancara CAVR dengan José Pinto, Viqueque, 18 Juli 2003.
44. Wawancara CAVR dengan Domingos Maria Bada, Turiscaí, Same, Manufahi, 14 Oktober 2003.
45. Pernyataan HRVD 02207; lihat juga pernyataan HRVD 02146; 02048.
46. Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2003.
47. Wawancara CAVR dengan Oscar Ramos Ximenes, Laleia, Manatuto, 24 Juni 2003.
48. Wawancara CAVR dengan Gil Parada Belo Martins, Lacluta, Viqueque, 15 Juli 2003.
49. Eurico Guterres, *Melintas Badai Politik Indonesia*, 2002, halaman 41-42.
50. Wawancara CAVR dengan Agostinho Soares, Ermera, 13 Agustus, 2003.
51. CAVR "Edisi 53: Laporan Khusus mengenai Audiensi Publik di Ataúro, Dili," *Dalan Ba Dame* (Jalan Menuju Perdamaian), Radio Timor-Leste (Dili), 5 Desember 2003.
52. ABRI, "Prinops No 2/Kilat-I Kolakops Tim-Tim Lampiran F," halaman 5.
53. Wawancara CAVR dengan Domingos Maria Bada, Same, Manufahi, 14 Oktober 2003.
54. Wawancara CAVR dengan José Pinto, Viqueque, 18 Juli 2003.
55. Wawancara CAVR dengan Domingos Maria Bada, Same, Manufahi, 14 Oktober 2003.
56. Belchior Francisco Bento Alves Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
57. Wawancara CAVR dengan Marcos Loina da Costa, Cairui, Laleia, Manatuto, 24 Juni 2003 dan wawancara CAVR dengan Agostinho Soares, Ermera, 13 Agustus 2003.
58. Wawancara CAVR dengan Marcos Loina da Costa, Laleia, Manatuto, 24 Juni 2003.
59. Pernyataan HRVD 03101.
60. Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2004.
61. Wawancara CAVR dengan Francisco da Silva Guterres, Dili, 4 Juni 2004.
62. Pernyataan HRVD 04876.
63. Pernyataan HRVD 02048.
64. Pernyataan HRVD 06054.
65. Wawancara CAVR dengan Eduardo Casimiro, Dili, 6 Agustus 2003.
66. Alfredo Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
67. Pernyataan HRVD 04435.
68. Pernyataan HRVD 07801.
69. Wawancara dengan Domingos Maria Bada, Same, Manufahi, 14 Oktober 2003.
70. Sertifikat ini disimpan dalam Arsip CAVR.
71. Wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 5 Mei 2004.
72. ABRI, *Juknis 06/IV/1982*, dalam Budiardjo dan Liem, halaman 226-227.
73. Wawancara CAVR dengan Eduardo Casimiro, Dili, 6 Agustus 2003.
74. Wawancara CAVR dengan Osório Florindo, Dili, 31 Mei 2003.
75. CAVR, Profil Komunitas Pairara, Moro, Lautém, 28 Maret 2003; Vatuvovo, Liquiça, Liquiça 26 Juni 2003; Vemasse Tasi, Vemasse, Baucau, 28 Maret 2003; Aisirimou, Aileu, Aileu, 27 Maret 2003; Ossu Desima, Ossu, Viqueque, 20 Maret 2003; Tim Peneliti CAVR, *Kronologi Lospalos*; wawancara CAVR dengan Leonel Guterres, Quelicai, Baucau, 8 April 2003 dan 24 April 2003; wawancara CAVR dengan José Pinto, Viqueque, 18 Juli 2003.

76. Profil Komunitas Parlamento, Moro, Lautém, 6 Maret 2003; Profil Komunitas Seloi Malere, Aileu, Aileu, 8 Mei 2003.
77. Wawancara CAVR dengan Francisco da Conceição Guterres, Toclul, Railaco, Ermera, 17 Juni 2003.
78. Wawancara CAVR dengan Osório Florindo, Dili, 31 Mei 2003.
79. Wawancara CAVR dengan Helio Freitas, Dili, 19 Mei 2003.
80. UNICEF, *East Timorese Children Involved in Armed Conflict, Case Studies Report: October 2000-February 2001*, UNICEF East Timor, Dili, halaman 63.
81. D. Jimenez, "Timor se convierte en un inmenso campo de refugiados" ["Timor menjadi satu kamp pengungsi yang sangat besar"], *El Mundo* (Spanyol), 10 September 1999, dikutip dalam Coalition to Stop the Use of Child Soldier, *Child Soldiers Global Report 2001* [Laporan Seluruh Dunia Mengenai Tentara Anak], London, Juni 2001.
82. UNICEF, halaman 70.
83. UNICEF, halaman 70.
84. UNICEF, halaman 78.
85. Yayasan HAK, *Terror, Violence and Intimidation – ABRI and the Pro-Integration Militia in East Timor: Report on the Human Rights Situation in East Timor for the period January to March 1999*, Dili, April 1999, halaman 3.
86. Geoffrey Robinson, *East Timor 1999: Crimes Against Humanity*, Laporan yang dibuat atas permintaan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Juli 2003, halaman 98.
87. Yayasan HAK, halaman 3.
88. CAVR, Profil Komunitas Lebos, Lolotoe, Bobonaro, 9 September 2003.
89. UNICEF, halaman 75-84.
90. Rofino Mesak, pernyataan diberikan pada 18 September 2003, Oecussi, Nomor Pernyataan Basisdata PRK CAVR.
91. UNICEF, halaman 61.
92. Mundus de Jesus, pernyataan diberikan pada 9 Juni 2003, Caikasa, Maubara, Liquiça, Basisdata PRK CAVR Nomor Pernyataan.
93. UNICEF, halaman 64-65.
94. Pernyataan HRVD 02947.
95. UNICEF, halaman 70.
96. Pernyataan HRVD 01351.
97. United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), *Human Rights Situation in East Timor* (Dokumen PBB: UN Doc. E/CN.4/S-4/CRP), UNHCHR, 17 September 1999, halaman 56.
98. UNICEF, halaman 10-11.
99. UNICEF, halaman 69.
100. UNICEF; Pernyataan HRVD 03513; 05859.
101. Pernyataan HRVD 03513.
102. UNICEF, halaman 62.
103. UNICEF, halaman 65.
104. Sarah Niner (penyunting), *Resistir é Vencer! (To Resist is to Win): The Autobiography of Xanana Gusmão*, Aurora Books, Richmond, Victoria, 2000, halaman 107; Xanana Gusmão, "Resistir é Vencer!", dokumen tidak diterbitkan.
105. Wawancara CAVR dengan Caetano de Sousa Guterres, Dili, 22 Mei 2004.
106. Wawancara CAVR dengan Panglima Falintil, Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak (José Maria de Vasconcelos), Markas Besar F-FDTL, Caicoli, Dili, 14 Juni 2004.
107. Wawancara CAVR dengan Ricardo da Costa Ribeiro, Dili, 13 Mei 2004.
108. Wawancara CAVR dengan Francisco Amaral, Dili, 5 Juni 2004.
109. Wawancara CAVR dengan Ricardo da Costa Ribeiro, Dili, 13 Mei 2004.
110. Naldo Gil da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
111. Aquilina Imaculada, *Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No. 16.
112. Mateus da Costa, *Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No 5.
113. Wawancara CAVR dengan Francisco da Silva Guterres, Dili, 4 Juni 2004.

114. Wawancara CAVR dengan Francisco da Silva Guterres, Dili, 4 Juni 2004.
115. Wawancara CAVR dengan João Sarmiento, Dili, 5 Juni 2004.
116. Gregório Saldanha, *Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No. 25.
117. Naldo Gil da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
118. Aquilina Imaculada, *Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No. 16.
119. Wawancara CAVR dengan Rosalina José da Costa, Ataúro, Dili, 30 November 2003.
120. Naldo Gil da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
121. Eduardo de Deus Barreto, *Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rei Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No. 13.
122. Aquilina Imaculada, *Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No. 16.
123. Constâncio Pinto dan Mathew Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle*, South End Press, 1997, halaman 118-119.
124. João da Silva (João Becora), kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, 29-30 Maret 2004.
125. A Paz e Possivel em Timor-Leste [Perdamaian Bisa Terjadi di Timor-Leste] (satu organisasi solidaritas Portugis), *Casualties of the November 12, 1991 Massacre at Santa Cruz Cemetery in Dili, East Timor: 271 Killed* [Korban Pembantaian 12 November 1991 di Pekuburan Santa Cruz di Dili, Timor-Leste: 271 Mati Dibunuh], Februari 1992, Dili dan Lisbon, <<http://www.etan.org/timor/KILLED.htm>> pada 30 Maret 2005.
126. Wawancara CAVR dengan Horacio de Almeida, Dili, 1 Juni 2004.
127. Alexandrino da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
128. Xanana Gusmão, pidato pada Simposium tentang Rekonsiliasi, Toleransi, Hak Asasi Manusia dan Pemilihan Umum, Dewan Nasional Perlawanan Timor (CNRT), Dili, 12 Februari 2001, halaman 3, dikutip dalam UNICEF, halaman 8.
129. UNICEF, halaman 18.
130. Wawancara CAVR dengan Eli Foho Rai Boot (Cornelio Gama, L-7), Laga, Baucau, 9 April 2003.
131. Wawancara CAVR dengan Faustino Cardoso Gomes, Dili, tanggal tidak tercatat.
132. Wawancara CAVR dengan Manuel Alves Pereira Moreira, Baucau, April 2003.
133. Wawancara CAVR dengan Joaquim Simão, Laleia, Manatuto, 24 Juni 2003.
134. Pernyataan HRVD 02160.
135. Wawancara CAVR dengan Felix do Rosario, Alas, Manufahi, 3 Juni 2003.
136. Constâncio Pinto and Matthew Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle*, 1977, halaman 50-54.
137. Pernyataan HRVD 07244.
138. UNICEF, halaman 27.
139. UNICEF, halaman 24.
140. UNICEF, halaman 37-38.
141. UNICEF, halaman 25.
142. Wawancara CAVR dengan Naldo Gil da Costa, Dili, 11 November 2003.
143. UNICEF, halaman 46.
144. Wawancara CAVR dengan Julio José Exposto Gago, Hatolia, Ermera, 13 Agustus 2003.
145. UNICEF, halaman 33.
146. Wawancara CAVR dengan Joaquim Simão, Laleia, Manatuto, 24 Juni 2003.
147. UNICEF, halaman 38.
148. UNICEF, halaman 37.
149. Wawancara CAVR dengan Felix do Rosário, Alas, Manufahi, 3 Juni 2003.
150. Pernyataan HRVD 01475.
151. CAVR, Konflik Antar-Partai, *Kumpulan Ringkasan Kasus*, 2003.
152. Wawancara CAVR dengan Felix do Rosário, Alas, Manufahi, 3 Juni 2003.
153. UNICEF, halaman 39.
154. Niner (penyunting), *Resistir é Vencer*, halaman 86.

155. Maeni Calado, "Saya Mengenal Clandestina dari Kawan-kawan Pribumi: Profil Annas Nasution," *Talitakum*, 12 Februari 2002, halaman 25-26.
156. Pernyataan HRVD 07671.
157. Pernyataan HRVD 05615.
158. Pernyataan HRVD 05433.
159. Pernyataan HRVD 01469.
160. Pernyataan HRVD 07813.
161. Pernyataan HRVD 00572.
162. Pernyataan HRVD 04093.
163. Pernyataan HRVD 02363.
164. Pernyataan HRVD 07586.
165. Isabel dos Santos Neves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
166. Pernyataan HRVD 05679.
167. Pernyataan HRVD 02094.
168. Wawancara CAVR dengan Adelino Araújo, Hatu Builico, Ainaro, 29 Mei 2003.
169. CAVR, Profil Komunitas Mehara, Tutuala, Lautém, 10 September 2002.
170. Pernyataan HRVD 03921.
171. Wawancara CAVR dengan Rosalina José da Costa, Ataúro Vila, Dili, 30 November 2003.
172. Pernyataan HRVD 07701.
173. Pernyataan HRVD 03686.
174. Wawancara CAVR dengan Joana Pereira, Dili, 10 Juni 2003; Joana Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, Dili, 28-29 Juli 2003.
175. Aida Maria dos Anjos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
176. Wawancara CAVR dengan Adalgisa Ximenes, Dili, 26 November 2003.
177. Pernyataan HRVD 04789.
178. Pernyataan HRVD 09038.
179. Human Rights Watch, *World Report 1990: Indonesia and East Timor*, <<http://www.hrw.org/reports/1990/WR90/ASIA.BOU-05.htm>>.
180. Pernyataan HRVD 03212.
181. Alexandrino da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
182. Sidney Jones (Direktur Eksekutif Asia Watch), kesaksian di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat, 21 Februari 1992, <<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1992/02/21/0002.html>>.
183. Pernyataan HRVD 01690.
184. Robinson, *East Timor 1999: Crimes Against Humanity*, 2003, halaman 197-198.
185. Pernyataan HRVD 06278.
186. Pernyataan HRVD 05854.
187. Pernyataan HRVD 03212.
188. Pernyataan HRVD 04355.
189. Pernyataan HRVD 07008.
190. Pernyataan HRVD 05062.
191. CAVR, Konflik Antar-Partai: Kasus 10, *Kumpulan Ringkasan Kasus*, 2003.
192. Pernyataan HRVD 09045; lihat pula Pernyataan HRVD 09081.
193. Constantinho Ornai, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, 29-30 Maret 2004.
194. Pernyataan HRVD 06546.
195. Pernyataan HRVD 02056.
196. Pernyataan HRVD 04845.
197. Pernyataan HRVD 06541.

198. Constantinho Ornai, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
199. Wawancara CAVR dengan José de Jesus dos Santos, Dili, 28 Juni 2004.
200. Pernyataan HRVD 03501.
201. Pernyataan HRVD 05640.
202. Pernyataan HRVD 00406.
203. Pernyataan HRVD 03828.
204. Pernyataan HRVD 03887.
205. Pernyataan HRVD 03501.
206. Pernyataan HRVD 02101-01.
207. Wawancara CAVR dengan Sebastião da Cunha, Sau, Manatuto, 12 Mei 2004.
208. Profil Komunitas, Leuru (Lospalos, Lautém), 27 Januari 2004.
209. Wawancara CAVR dengan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004.
210. Wawancara CAVR dengan Jerónimo da Costa Amaral, Viqueque, 10 Maret 2004.
211. Pernyataan HRVD 08108.
212. Peace is Possible in Timor-Leste, 1992, <<http://www.etan.org/timor/KILLED.htm>>, pada 30 Maret 2005.
213. Yayasan Hak, *From the road to Dili to the shootings in Baucau* [Dari jalan ke Dili sampai penembakan di Baucau], 1 Juli 1998. [East Timor International Support Centre, ETISC] <<http://www.etan.org/et/1998/july/01road.htm>>, pada 31 Maret 2005.
214. Raimundo Sarmiento, kesaksian pada Audiensi Subdistrik Laclubar CAVR, Manatuto, 2 Oktober 2003.
215. Pernyataan HRVD 03684.
216. Pernyataan HRVD 02285; 04060.
217. *Deputy General Prosecutor for Serious Crimes v Eurico Guterres et al.*, paragraf 51-58.
218. *Prosecutor of the UN Transitional Authority in East Timor v Simão Lopes et al.*
219. Robinson, 2003, halaman 228.
220. Robinson, 2003, halaman 245-247
221. Robinson, 2003, halaman 231.
222. Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 21 September 2004.
223. Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 21 September 2004.
224. Wawancara CAVR dengan Maria Santana Tilman Alves, Ermera, 10 Oktober 2003.
225. Wawancara CAVR dengan Filomeno Pedro Cabral Fernandes, Dili, 5 Mei 2004.
226. Pernyataan HRVD 06639.
227. Pernyataan HRVD 04915.
228. Pernyataan HRVD 07784; 04915.
229. Pernyataan HRVD 05783.
230. Pernyataan HRVD 05120.
231. Pernyataan HRVD 07840; 06639.
232. United Nations, *Contemporary Forms of Slavery: Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-like Practices during Armed Conflict* (E/CN.4/Sub.2/1998/13), Laporan Akhir disampaikan Gay J. McDougall, Pelapor Khusus, New York: United Nations, 1998, halaman 7-8.
233. Wawancara CAVR dengan Eufrasia de Jesus Soares, Ermera, Ermera, 22 Desember 2003.
234. Pernyataan HRVD 03334.
235. Alfredo Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, 29-30 Maret 2004.
236. Wawancara CAVR dengan DM, Luca, Viqueque, 1 Juni 2003.
237. Wawancara CAVR dengan FM, Beobe, Viqueque, 31 Mei 2003.
238. Pernyataan HRVD 07209.
239. Pernyataan HRVD 01022.
240. Pernyataan HRVD 04080.
241. Mário Viegas Carrascalão, "Kekerasan terhadap Perempuan dan Keluarga Berencana" yang terjadi di Timor Leste selama pendudukan Indonesia, tahun 1982-1992," Submisi kepada CAVR, 28 April 2003.

242. Pernyataan HRVD 07196.
243. Pernyataan HRVD 02321.
244. Wawancara CAVR dengan LM, Bibileo, Lalarek Mutin, Viqueque, 24 Maret 2004.
245. Pernyataan HRVD 05775.
246. CAVR, Perempuan: Kasus 4, *Kumpulan Ringkasan Kasus*, Januari 2004.
247. CAVR, Perempuan: Kasus 5, *Kumpulan Ringkasan Kasus*, Januari 2004.
248. Pernyataan HRVD 05777.
249. Pernyataan HRVD 04198.
250. [Nama disembunyikan], *Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin*, Submisi kepada CAVR, CD No 3.
251. Pernyataan 04482.
252. Fokupers, *Kekerasan Berbasis Gender 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, Pernyataan HRVD No. 99COV004.
253. Fokupers, *Kekerasan Berbasis Gender 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, Pernyataan HRVD No. 99COV010.
254. Pernyataan HRVD 08980.
255. Fokupers, *Kekerasan Berbasis Gender 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, Pernyataan HRVD 99AIL001.
256. Fokupers, *Kekerasan Berbasis Gender 1999*, Submisi kepada CAVR, Juli 2004, Pernyataan HRVD 99AIN007.
257. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Evaluation and Policy Analysis Unit, Evaluation on UNHCR's repatriation and reintegration programme in East Timor, 1999-2003* [Penilaian mengenai program pemulangan dan reintegrasi UNHCR di Timor-Leste, 1999-2003], 24 Februari 2004, halaman 59.
258. Wawancara CAVR dengan Palang Merah Internasional/Cruz Vermelha de Timor-Leste, Dili, 7 April 2004.
259. Wawancara CAVR dengan Mário Carrascalão, Dili, 12 September 2003.
260. Helene van Klinken, *East Timorese Children in Java: Submission II*, Submisi kepada CAVR, 2002, halaman 4.
261. UNHCR, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004; lihat pula Office Of The High Commissioner For Human Rights (OHCHR), *Quarterly Reports of Fields Offices*, Jenewa, 3 Juni 2003.
262. Wawancara CAVR dengan Manuel Cárceres, UNHCR, Dili, 28 Maret 2005.
263. Wawancara CAVR dengan Valderio de Araújo, tempat tidak tercatat, 22 Oktober 2003.
264. Wawancara dengan [nama disembunyikan], Dili, 25 Agustus 2003.
265. Petrus Kanisius Alegria, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
266. Ibid.
267. Alfredo Reinado Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 28-29 Maret 2004.
268. Wawancara CAVR dengan Alexander dos Santos, Ermera, 10 September 2003; wawancara CAVR dengan Manuel Martins, Ponilala (Ermera), 10 September 2003.
269. Wawancara CAVR dengan Yuliana, Jakarta, 15 Januari 2004.
270. Yuliana, kesaksian pada lokakarya CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 15 Juli 2004.
271. Wawancara CAVR dengan Maria Legge Mesquita, Dare, Dili, 14 April 2004.
272. Wawancara CAVR dengan QN, Ermera, 13 Agustus 2003 dan 1 April 2004.
273. Wawancara CAVR dengan Domingos de Deus Maia, Same, Manufahi 20 April 2004.
274. Wawancara CAVR dengan Aidia, Bobonaro, Bobonaro, 11 Mei 2004; lihat juga wawancara CAVR dengan Alexander dos Santos, Ermera, 10 September 2003.
275. Helene van Klinken, *Submisi II*, 2002, halaman 4.
276. Petrus Kanisius Alegria, kesaksian pada Audiensi Publik CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
277. Petrus Kanisius Alegria, kesaksian pada Audiensi Publik CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
278. Wawancara CAVR dengan Petrus Kanisius Alegria, Dili, 16 Juni 2003.

279. Helene van Klinken, *Children and Conflict*, Submisi kepada CAVR, November 2003, halaman 23.
280. Wawancara CAVR dengan Petrus Kanisius Alegria, Dili, 16 Juni 2003.
281. Wawancara CAVR dengan Mário Carrascalão, Dili, 12 September 2003.
282. Wawancara CAVR dengan Mário Carrascalão, Dili, 12 September 2003.
283. Wawancara CAVR dengan Abel dos Santos, Dili, 7 April 2003.
284. CAVR, *Kumpulan Ringkasan Kasus*, 2003.
285. Helene van Klinken, *East Timor Children in South Sulawesi*, Submisi kepada CAVR, Maret 2002, halaman 2.
286. Wawancara CAVR dengan Abidin Arianto, Baucau, 9 April 2003.
287. Simon Elegant, "Timor's Lost Boys," *TIME Asia Magazine*, 23 Desember 2002.
288. Wawancara dengan Najib Abu Yasser, Radio Voice of Human Rights, Jakarta, April 2002, dalam Helene van Klinken, *Submisi II*, 2002, halaman 1.
289. Wawancara CAVR dengan Leonel Guterres, Quelicai, Baucau, 8 April 2003.
290. Wawancara CAVR dengan Syamshul Bahri, tempat tidak tercatat, 9 April 2003.
291. George Aditjondro, "Yayasan-yayasan Soeharto...", 31 Januari 1998, halaman 134.
292. Asia Watch, *Deception and Harassment of East Timorese Workers* [Penipuan dan Pelecehan Pekerja Timor-Leste], 19 Mei 1992, halaman 2.
293. Wawancara CAVR dengan João da Costa, Baucau, Baucau, 23 April 2003.
294. Wawancara CAVR dengan João da Costa, Baucau, Baucau, 23 April 2003.
295. Wawancara CAVR dengan Maria Margarida Babo (Garida), Dili, tanggal tidak tercatat.
296. Wawancara CAVR dengan Maria Margarida Babo (Garida), Dili, tanggal tidak tercatat; lihat juga Guilherme dos Reis, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, Dili, 29-30 Maret 2004.
297. Wawancara CAVR dengan Pendeta Agostinho de Vasconcelos, Komisaris Nasional CAVR, Dili, 7 Agustus 2003.
298. Helene van Klinken, *East Timorese Children in Central Java, Post 1999: Submission III*, Submisi kepada CAVR, Juli 2001, halaman 9.
299. *East Timorese Children on Other Islands*, rapat antara UNICEF Indonesia, UNICEF East Timor, UNTAET Social Services, IRC, JRS, dan UNHCR, Dili, 2 November 2000.
300. Ibid.
301. Arist Merdeka Sirait, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dalam Helene van Klinken, *Separated Children Post August 1999*, Submisi kepada CAVR, 2002, halaman 1.
302. Jesuit Refugee Service, "The Lost of East Timorese Children [sic]," *Terms of Reference, Family Reunification Visit of the Parents to the Children in South Kalimantan*, Atambua (rancangan 22/01/01), halaman 2.
303. Natercia M.J.O. Soares (Ketua Umum Yayasan HATI), "Pendidikan Anak Asrama dan Tanggung jawab Orangtua," *Kompas*, 5 Oktober 2001, <http://www/hati.or.id/kompas140901.htm> pada 30 Maret 2005.
304. Ibid.
305. Helene van Klinken, *Separated Children Post-August 1999*, Submisi kepada CAVR, 2002, halaman 3.
306. Jesuit Refugee Service, halaman 2.
307. Wawancara CAVR dengan Zacarias Pereira, Tibar, Liquiça, 5 Mei 2004.
308. Dateline, "East Timor's Stolen Children," SBS (Australia), 4 September 2002.
309. Wawancara CAVR dengan Mário Carrascalão, Dili, 12 September 2003.
310. Wawancara CAVR dengan Mário Carrascalão, Dili, 12 September 2003.
311. Wawancara CAVR dengan [nama disembunyikan], Bandung, Jawa Barat, 28 dan 31 Januari 2004.
312. Wawancara CAVR dengan Maria Floriana da Conceição, Bandung, Jawa Barat, 31 Januari 2004.
313. Wawancara CAVR dengan Petrus Kanisius Alegria, Dili, 16 Juni 2003.
314. Wawancara CAVR dengan Domingos de Deus Maia, Dili, 20 April 2004.
315. Wawancara CAVR dengan Sudirman, Dili, 25 April 2003.
316. Wawancara CAVR dengan Alfredo Alves, Dili, 5 Maret 2004.



Chega!

Bagian 7
Bab 7.9.

Hak ekonomi dan sosial

2441 | Pendahuluan

2444 | Boks: Kewajiban penguasa pendudukan yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi

2445 | Kerja Komisi mengenai hak sosial dan ekonomi

2446 | Hubungan hak sosial dan ekonomi dengan hak-hak lainnya

2448 | Hak atas standar hidup yang memadai

2448 | Pembangunan dan pengeluaran pemerintah

2453 | Sektor kopi

2454 | Manajemen sektor perkebunan kopi masa pemerintahan Indonesia

2456 | Nilai sektor kopi

2460 | Keterlibatan militer dalam perekonomian Timor-Leste

2460 | Hak rakyat untuk menggunakan sumberdaya alam

2460 | Kayu cendana

2461 | Hutan

2462 | Laut Timor

2463 | Hak untuk mendapatkan makanan

2466 | Boks: Akibat ekonomi dan sosial dari 'kamp pemukiman kembali'

2470 | Rumah dan tanah

2474 | Boks: Dampak ekonomi dari politik pembumihangusan 1999

2475 | Hak atas kesehatan

2475 | Pengertian 'hak atas kesehatan'

2477 | Kesehatan masyarakat di masa kekuasaan Portugis

2478 | Pendudukan Indonesia

2478 | Tingkat kematian ibu dan anak serta perkembangan anak

2479 | Pengurangan wabah penyakit

2480 | Akses pada pelayanan kesehatan

2482 | Boks: Dampak ekonomi dan sosial pengungsian ke Timor Barat 1999

2483 | Pengendalian kelahiran secara paksa

2490 | Kesehatan jiwa dan trauma

2491 | Boks: Perekrutan paksa

2494 | Hak atas pendidikan

2494 | Boks: Hak atas pendidikan

2501 | Temuan

2501 | Temuan umum

2502 | Temuan spesifik

2502 | Hak atas standar hidup yang layak

2502 | **Pembangunan dan pengeluaran pemerintah**

2503 | **Hak atas sumberdaya alam**

2503 | **Hak untuk mendapatkan makanan yang layak**

2503 | **Perumahan dan tanah**

2504 | Hak atas kesehatan dan pendidikan

Daftar tabel:

2448 | **Tabel 1** : Alokasi Dana Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) untuk Provinsi Timor Timur dan Beberapa Provinsi Terpilih, 1969/1970-1993/1994 (dalam Rp miliar)

2449 | **Tabel 2** : Anggaran dan dana Instruksi Presiden (Inpres) yang dialokasikan untuk Provinsi Timor Timur, 1976/1977-1992/1993

2450 | **Tabel 3** : Pangsa sektoral PDB dan tingkat pertumbuhan 1984-1997 (%)

2451 | **Tabel 4** : Struktur investasi negara per sektor 1984/1985-1993/1994 (%)

2452 | **Tabel 5** : Indikator Ekonomi Pembandingan: Timor-Leste dan Indonesia

2453 | **Tabel 6** : Timor-Leste: Indikator Pendapatan dan Kemiskinan 1990-1999

2457 | **Tabel 7** : Harga kopi dan produksi 1975-1993

2478 | **Tabel 8** : Indikator Pembangunan Terpilih 1996

2496 | **Tabel 9** : Murid dan Guru di Timor-Leste 1998/1999

2497 | **Tabel 10**: Kemiskinan dan Tingkat Pendidikan di Timor-Leste

Daftar grafik:

2456 | **Grafik 1** : Harga pasar kopi (1974-2000)

2493 | **Grafik 2** : Jumlah tindak rekrutmen paksa yang dilaporkan kepada Komisi, 1974-1999

2493 | **Grafik 3** : Jumlah perekrutan paksa menurut pelaku, 1974-1999

Hak ekonomi dan sosial

7.9.

Pendahuluan

1. Di bawah pendudukan Indonesia, rakyat Timor-Leste mengalami berbagai bentuk pelanggaran brutal, baik terhadap integritas fisik maupun hak-hak sipil dan politik mereka. Tapi, dampak dari kondisi hidup mereka, meskipun tidak sering dibahas, juga sama buruknya dan mungkin berlangsung lebih lama.
2. Hak-hak ekonomi dan sosial penduduk Timor-Leste dilanggar secara luas selama pendudukan Indonesia. Hak-hak ini dijabarkan dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB), Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan, untuk anak-anak, Konvensi tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC). Aturan khusus dalam Konvensi Jenewa Keempat menyebutkan kewajiban penguasa pendudukan untuk melindungi keadaan sosial dan ekonomi penduduk sipil.
3. Hak-hak yang dilindungi dalam instrumen di atas meliputi:
 - Hak untuk mendapatkan standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi mungkin (KIHESB, Pasal 12 dan CRC, Pasal 24)
 - Hak atas pendidikan (KIHESB Pasal 13, DUHAM Pasal 26, dan CRC Pasal 28-29)
 - Hak seorang individu untuk melakukan pekerjaan yang dipilih sendiri secara bebas (KIHESB Pasal 6, DUHAM Pasal 23, dan CRC Pasal 32)
 - Hak atas standar hidup yang memadai, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang memadai, dan perbaikan terus-menerus kondisi kehidupan (KIHESB Pasal 11, DUHAM Pasal 25, dan CRC Pasal 27).
4. Selama pendudukan Indonesia hak-hak yang sering dilanggar meliputi:
 - Hak atas kesehatan (KIHESB Pasal 12, CRC Pasal 24) dilanggar dalam penjara-penjara politik dan dengan penggunaan siksaan dan dengan kondisi

kamp penampungan yang mengerikan. Pada 1999, TNI dan milisi merusak 77% fasilitas kesehatan dan hampir semua peralatan medis serta obat-obatan dirampok atau dimusnahkan.¹

- Hak atas pendidikan (KIHESB Pasal 13, DUHAM Pasal 26, CRC Pasal 28-29) dilanggar, korbannya penduduk yang dipaksa tinggal dalam kamp pemukiman-ulang dan penduduk yang dipaksa berdinasi militer sebagai 'tenaga bantuan operasi' (TBO).
- Hak atas pekerjaan yang dipilih sendiri dengan bebas (KIHESB Pasal 6, DUHAM Pasal 23, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik [KIHP] Pasal 8.3.a, CRC Pasal 32, 38.2) dilanggar dengan memaksa penduduk terlibat dalam operasi militer sebagai TBO, milisi sipil, atau perisai hidup, dan berbagai bentuk lain kerja paksa.
- Hak atas perumahan (KIHESB Pasal 11, DUHAM Pasal 25) dilanggar dengan tindakan pengusiran paksa dan penghancuran rumah secara besar-besaran (lihat Bagian 7, Bab. 7.3: Pemandahan Paksa dan Kelaparan).
- Hak atas standar hidup yang layak (KIHESB Pasal 11, DUHAM Pasal 25, CRC Pasal 27) dilanggar dengan pemindahan penduduk ke kamp-kamp penahanan yang keadaannya sangat buruk.
- KIHESB dan KIHP (dalam pasal 1[2], keduanya) juga menerapkan hak suatu rakyat untuk menggunakan dengan bebas kekayaan dan sumberdaya alamnya. Hak ini merupakan salah satu segi dari hak atas penentuan nasib sendiri.
- Hak rakyat Timor-Leste untuk menggunakan dengan bebas sumberdaya alam (KIHESB Pasal 1.2) dilanggar dengan adanya Perjanjian Celah Timor yang ditandatangani oleh Indonesia dan Australia, yang membagi hasil dari ladang minyak bumi dan gas yang kaya di wilayah kedaulatan Timor-Leste tanpa berkonsultasi dengan rakyat Timor-Leste atau tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat Timor-Leste.

5. Satu tema propaganda Indonesia yang terus-menerus ada selama pendudukan adalah perbedaan antara keterbelakangan yang dikatakan merupakan warisan utama kolonialisme Portugal dan pembangunan pesat yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Timor-Leste. Dalam hal-hal yang dikemukakan di atas, pemerintah Indonesia nyata sekali gagal membuktikan pengakuannya bahwa yang menjadi perhatian utama mereka adalah kesejahteraan rakyat Timor-Leste. Gelombang-gelombang kekerasan dan represi serta pengendalian politik dan sosial yang ekstrem oleh militer Indonesia sangat menghambat kegiatan hidup sehari-hari, termasuk kebebasan bergerak, bertani, dan kemampuan untuk mengangkut dan memasarkan barang-barang.

6. Meskipun demikian, pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial bukan hanya merupakan hasil sampingan dari operasi militer. Bahkan pada saat-saat yang relatif normal, kekhawatiran mengenai keamanan, yang kadang-kadang bercampur dengan kepentingan pribadi dan perusahaan, lebih diutamakan daripada kesejahteraan rakyat Timor-Leste. Pendidikan yang secara terang-terangan digunakan sebagai alat propaganda dan bukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pembelajaran membatasi

perkembangan anak-anak dan peluang masa depan. Pemandangan desa ke wilayah-wilayah yang sebelumnya dihindari karena kondisi tanah yang buruk dan malaria telah membahayakan kesehatan masyarakat. Manipulasi harga kopi untuk membiayai operasi militer dan menguntungkan pejabat sipil dan militer secara pribadi membatasi kesempatan para petani untuk mendapatkan hidup layak. Pengambilan sumberdaya alam oleh para pejabat pemerintah dan rekanan usaha mereka dengan cara yang merusak dan tidak menjaga kelangsungannya, menghancurkan strategi kelangsungan hidup dan menguras 'modal alam' yang diharapkan oleh rakyat Timor-Leste untuk bisa dipergunakan dalam jangka panjang. Terpusatnya perhatian pada keamanan cenderung mengalihkan dana investasi negara ke bidang-bidang seperti pembangunan jalan dan perluasan aparat pemerintah dengan mengorbankan pertanian yang mempekerjakan sebagian besar penduduk Timor-Leste.*

7. Hak-hak ekonomi dan sosial dikemukakan dengan jelas dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB). Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Kovenan ini, ketentuan-ketentuan di dalamnya memberikan standar untuk menilai tindakan Indonesia selama masa pendudukan Timor-Leste. Di dalam Kovenan itu sendiri dan dalam penjelasan yang diuraikan oleh Komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diakui bahwa karena tahap perkembangan ekonomi setiap negara tidak sama, tidak semua negara bisa memenuhi semua hak yang tercantum dalam Kovenan itu. Karena itu, negara wajib mengambil tindakan untuk mencapai tingkat pemenuhan hak-hak tersebut secara bertahap sesuai kemampuan setiap negara. Namun, pada saat yang sama, setiap negara mempunyai tanggung jawab inti yang harus selalu dipenuhi. Ini termasuk tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar tertentu, seperti makanan, tempat tinggal, obat-obatan dasar, dan pendidikan dasar. Ketentuan-ketentuan tersebut juga melarang negara-negara baik untuk bersikap diskriminatif dalam pemenuhan jaminan sosial dan ekonomi, maupun melakukan langkah mundur yang dapat memperburuk pemenuhan hak-hak yang sudah dinikmati rakyat.

8. Komisi yakin bahwa Indonesia melanggar hak-hak ekonomi dan sosial pada setiap tingkatan di atas. Dalam banyak hal, negara mengambil langkah keamanan yang ekstrem yang bertolak-belakang dengan tanggung jawab inti yang semestinya dipenuhi. Dalam keadaan demikian, negara gagal memenuhi kebutuhan dasar penduduk, dan justru sering mengambil langkah mundur dan diskriminatif.† Komisi juga menemukan bahwa negara Indonesia tidak mengupayakan setinggi mungkin pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Timor-Leste, dan di akhir masa pendudukan, pembangunan di Timor-Leste masih jauh tertinggal dibandingkan provinsi Indonesia yang paling miskin sekalipun (lihat Tabel 5 pada paragraf 26). Kesimpulan ini mungkin mengejutkan. Tingkat investasi Indonesia di Timor-Leste sangat besar dan tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)

* Kebijakan-kebijakan ini juga harus ditempatkan dalam konteks rezim Orde Baru Soeharto (1965-1998). Untuk tinjauan mengenai rezim ini lihat Bagian 3: Sejarah Konflik.

† Banyak pelanggaran yang dibahas dalam bab ini adalah pelanggaran terhadap tanggung jawab inti tersebut, yang sering berupa pelanggaran berganda yang bersifat retrogresif (memperburuk keadaan). Pelanggaran-pelanggaran ekstrem semacam ini ditonjolkan dalam bab ini dengan ditempatkan dalam boks.

yang dihasilkan cukup tinggi. Selain itu, rendahnya standar yang ditinggalkan Portugal membuat kemajuan yang dicapai di beberapa bidang, seperti kesehatan dan pendidikan, terlihat mengesankan. Namun, Komisi menemukan bahwa alokasi investasi, distribusi PDB, dan pemberian layanan sosial, termasuk kesehatan dan pendidikan, semuanya dinihkan oleh kesibukan berlebihan pemerintah Indonesia dengan masalah keamanan, gaya pemerintahan yang otoriter, dan persekongkolannya dengan kepentingan-kepentingan tertentu.

9. Temuan ini jelas menunjukkan kaitan erat antara pelanggaran berat hak-hak sipil dan politik dengan pengabaian hak-hak ekonomi dan sosial. Di Timor-Leste, pengingkaran kebebasan sipil dan politik dasar muncul dalam bermacam bentuk, tapi beberapa di antaranya membantu berkembangnya faktor-faktor yang oleh Komisi diidentifikasi telah menghambat pemenuhan hak-hak sosial dan politik rakyat Timor-Leste.

Kewajiban penguasa pendudukan yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi

Karena Indonesia berstatus sebagai penguasa pendudukan di Timor-Leste, Komisi juga menganggapnya memiliki kewajiban-kewajiban penguasa pendudukan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Jenewa Keempat 1949 dan Ketentuan Lampiran Konvensi Den Haag 1907 yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial.

Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Penguasa pendudukan harus memenuhi kebutuhan makanan dan medis penduduk pada tingkat yang setinggi mungkin, dan jika sumberdaya wilayah yang diduduki tidak mencukupi, penguasa pendudukan harus mengimpor makanan, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Makanan dan obat-obatan di wilayah yang diduduki bisa diambilalih oleh penguasa pendudukan hanya jika mutlak diperlukan oleh penguasa pendudukan dan hanya jika kebutuhan penduduk sipil telah terpenuhi, dan harus dibayar dengan harga yang baik. Jika diperlukan, penguasa pendudukan harus menerima bantuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. (Konvensi Jenewa Keempat, Pasal 55, 56, dan 59-62)
- Penguasa pendudukan dilarang menyita barang milik pribadi atau terlibat dalam penjarahan, meskipun barang pribadi tertentu bisa diambilalih dengan ganti rugi. (Ketentuan Den Haag, dilampirkan pada Konvensi Den Haag IV, 1907, Pasal 46, 47, 52, dan 53.)
- Barang tertentu milik negara bisa digunakan oleh penguasa pendudukan, dan sumberdaya alam wilayah yang diduduki bisa digunakan untuk menutup biaya pendudukan, tapi tidak boleh dieksploitasi untuk keuntungan umum negara yang menduduki.

- Barang-barang untuk pendidikan, kebudayaan, atau amal, walaupun yang dimiliki oleh pemerintah, harus diperlakukan seperti barang milik pribadi dan tidak boleh diambil atau dihancurkan dalam keadaan apapun. (Ketentuan Den Haag, dilampirkan pada Konvensi Den Haag IV, 1907, Pasal 56)
- Penduduk sipil tidak boleh dipaksa berdinasi dalam pasukan militer atau pasukan bantuan penguasa pendudukan, dan propaganda yang bertujuan mendorong orang masuk dinas militer secara sukarela dilarang. Orang sipil berusia di atas delapan belas tahun bisa dipaksa untuk melakukan kerja bukan militer untuk keperluan langsung penguasa pendudukan, tetapi bayaran dan kondisi kerja mereka harus layak. (Konvensi Jenewa Keempat, Pasal 51)

Kerja Komisi mengenai hak sosial dan ekonomi

10. Dengan semakin berkembangnya kerja di bidang pencarian kebenaran, Komisi semakin banyak menemukan bukti pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial secara langsung, serta hubungan erat antara pelanggaran hak-hak tersebut dengan pelanggaran hak-hak sipil dan politik yang menjadi titik perhatian kerja Komisi. Komisi kemudian memutuskan agar kenyataan ini dimasukkan dalam Laporan Akhir. Pada saat yang sama, Komisi juga mengakui keterbatasan analisis mengenainya. Sebisa mungkin staf Komisi melakukan wawancara, tapi kerja di bidang ini lebih banyak menggunakan bahan-bahan sekunder. Karena sangat tertutupnya Timor-Leste selama masa pendudukan, dan karena penelitian pada masa itu memusatkan pada kebutuhan mendesak untuk menghentikan pelanggaran besar-besaran hak-hak sipil dan politik, data sosial dan ekonomi jarang tersedia. Data ekonomi yang ada kualitasnya berbeda-beda dan perlu disikapi dengan hati-hati.

11. Penyelidikan Komisi tentang pelanggaran hak sosial dan ekonomi dipusatkan pada peran Indonesia. Komisi hanya memerhatikan peran negara Indonesia, dan tidak melihat aktor-aktor lain seperti partai politik Timor-Leste, karena hak sosial dan ekonomi dinilai dengan mempertimbangkan kebijakan dan praktik dari suatu pemerintah efektif, dan hanya bisa ditinjau dalam jangka panjang. Ini karena hak sosial dan ekonomi pertama-tama adalah hak rakyat terhadap perbaikan terus-menerus keadaan ekonomi dan sosialnya. Komisi mengakui bahwa aktor-aktor lain, termasuk aktor-aktor non-negara di Timor-Leste, melakukan tindakan yang merugikan keadaan sosial dan ekonomi rakyat. Banyak dari tindakan-tindakan ini dibahas dalam Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan, dan dalam Bab 7.5: Pelanggaran Hukum Perang, tetapi tidak dimasukkan di sini karena bukan merupakan tindakan dari pemerintah efektif dengan kontrol yang berlangsung lama atas wilayah Timor-Leste.

12. Karena keterbatasan sumberdaya, Komisi hanya bisa membahas pelanggaran hak budaya yang disebutkan dalam KIHESB sejauh hak ini tidak terpisahkan dari

pelanggaran hak sosial dan ekonomi. Dalam bab ini, Komisi mengajukan bukti tentang praktik-praktik penguasa Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, dan hak atas tanah, yang melanggar norma dan integritas kebudayaan Timor-Leste. Namun, Komisi tidak bisa menilai dampak pendudukan pada kebudayaan Timor-Leste secara terperinci dan sistematis. Komisi menyesali hal ini dan sangat menyarankan agar diadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

13. Karena berbagai alasan di atas, bab ini tidak dapat dianggap sebagai pengungkapan kebenaran yang tuntas tentang pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial. Sebaliknya, bab ini harus dilihat sebagai suatu sumbangan ke arah itu, dan pemicu untuk penelitian lebih lanjut yang bertujuan mencari kebenaran dan rekonsiliasi.

Hubungan hak sosial dan ekonomi dengan hak-hak lainnya

14. Adanya dua kovenan internasional, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, tampak mempertegas pemisahan antara kedua jenis hak tersebut. Tapi sebenarnya, pembukaan kedua Kovenan tersebut mengakui bahwa kedua hak tersebut tidak terpisahkan. Kovenan Internasional tentang Hak, Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyebutkan:

Cita-cita mengenai manusia merdeka yang menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan lapar hanya dapat dicapai bila tercipta kondisi di mana setiap orang bisa menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak-hak sipil dan politik.*

15. Hubungan erat ini dipertegas oleh Deklarasi Wina yang dicetuskan pada 1993 dalam Konferensi Dunia PBB tentang Hak Asasi Manusia:

Demokrasi, pembangunan, dan penghormatan kepada hak asasi dan kebebasan hakiki manusia saling terkait dan saling menguatkan. Demokrasi didasarkan pada kehendak rakyat yang diungkapkan dengan bebas untuk menentukan sistem-sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya mereka sendiri, serta partisipasi penuh mereka di segala bidang kehidupan.²

16. Penting diperhatikan dampak kurangnya perhatian pada hak-hak sosial dan ekonomi oleh pengamat luar dan pengamat Indonesia, dibandingkan perhatian kepada hak-hak sipil dan politik. Gabungan pelanggaran hak sosial dan hak ekonomi dalam kondisi kemiskinan yang parah, seperti yang dialami rakyat Timor-Leste, sering digunakan menjadi penjelasan mengapa pelanggaran tersebut tidak mendapat perhatian tersendiri. Memang luas dan mendalamnya pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi sering membuat kita lupa akan beratnya pelanggaran tersebut dan sifat hakikinya sebagai hak asasi manusia. Komisi PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dalam pernyataannya pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993, menarik perhatian peserta kepada:

* Pembukaan KIHSP isinya hampir sama.

Suatu kenyataan yang menghebohkan bahwa negara-negara di dunia dan masyarakat internasional masih sering membiarkan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang bila terjadi bersama dengan pelanggaran hak sipil dan politik, akan menimbulkan ungkapan kengerian dan amarah.

Indikator-indikator statistik mengenai pengabaian, atau pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya, sudah begitu sering dikutip sehingga mereka cenderung kehilangan dampaknya. Bobot, keparahan, serta terus berlangsungnya pengabaian hak ini membuat orang menjadi pasrah, putus asa, dan matirasa. Tanggapan membisu semacam ini diperparah dengan keengganan untuk melihat persoalan ini sebagai pengingkaran besar-besaran atas hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, pada saat yang sama sulit untuk melihat bagaimana keadaan ini dapat digambarkan secara realistis dengan cara lain.³

17. Selain itu, rendahnya nilai uang dari aset yang hilang di kalangan penduduk miskin sering menjadi sebab tidak adanya perhatian pada pelanggaran yang terjadi ketika aset tersebut dirusak. Misalnya, ketua delegasi Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk Timor-Leste pada 1975, dalam penilaiannya mengenai dampak perang saudara, mengecilkan nilai kerusakan harta benda:

Tidak ada kerusakan material yang parah... Di wilayah perdalaman pulau ini, banyak desa yang dibakar, terutama di kawasan Maubisse, Ainaro, tetapi pembangunan kembali rumah gubuk tidak menjadi persoalan bagi penduduk setempat.⁴

18. Nilai uang gubuk-gubuk sederhana ini mungkin tidak besar, dan bahan-bahan untuk membangunnya kembali memang tersedia. Namun, masalah mendasarnya adalah bahwa semakin sedikit milik seseorang, akan semakin besar dampak dari kehilangan rumah, harta benda, dan ternak itu. Perusakan dan perampasan harta benda penduduk miskin yang terjadi berulang-ulang—pertama-tama oleh Portugis, kemudian oleh partai-partai politik yang berseteru, selanjutnya oleh militer Indonesia, dan kemudian oleh milisi—membuat pemulihan berjalan lambat, dan sangat berat dari segi ekonomi maupun emosional. Orang-orang yang berada di pinggir jurang penyakit, kelaparan, dan ketidaktahuan karena kemiskinan yang parah adalah yang sangat memerlukan perlindungan untuk hak-hak ini. Memang tidak adanya pemantauan yang ketat pada hak-hak mereka itu sendiri merupakan indikasi dari diabaikannya kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat Timor-Leste.

.....
* Sementara maksud komentarnya jelas, kita perlu memahami konteksnya. Dari laporan-laporan internal ICRC, notula rapat, dan catatan percakapan telepon (ada dalam arsip CAVR), jelas bahwa utusan ICRC André Pasquier merasa yakin bahwa keadaan Timor-Leste pada akhir 1975 (sebelum invasi Indonesia) sangat dibesar-besarkan oleh badan-badan lain dan pers. Selanjutnya ia merasa bahwa "80% masalah gizi yang saat ini ada di Timor bukan akibat perang tetapi lebih merupakan akibat sistem ekonomi yang dijalankan Portugis." Karena itu, komentar-komentar dalam laporannya banyak berupaya untuk mengecilkan dampak perang saudara dan perlunya bantuan dari luar.

Hak atas standar hidup yang memadai

19. Hak setiap orang atas standar kehidupan yang memadai meliputi hak untuk bebas dari kelaparan, mendapatkan akses ke sarana ekonomi untuk mempertahankan hidup, dan mempunyai pakaian serta tempat tinggal. Pada dasarnya ini berarti mengeluarkan warga dari kemiskinan dan menciptakan kondisi bagi mereka agar dapat menjalani hidup sesuai potensi mereka. Hak-hak ini, dan bagaimana pelaksanaannya, dibahas di bawah.

Pembangunan dan pengeluaran pemerintah

20. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Indonesia sering menyebutkan investasinya yang besar dalam pembangunan Timor-Leste sebagai bukti niat baiknya kepada rakyat Timor-Leste. Memang benar bahwa Indonesia telah melakukan investasi di Timor-Leste lebih banyak daripada provinsi-provinsinya. Sebanyak Rp1,3 miliar telah dialokasikan untuk pembangunan di wilayah ini antara 1976/1977 dan 1993/1994 (setara dengan USD960 juta). Sebagai perbandingan, jumlah ini adalah 50% lebih banyak daripada yang dialokasikan untuk provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertetangga (lihat Tabel 1 & 2).

Tabel 1: Alokasi Dana Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) untuk Provinsi Timor Timur dan Beberapa Provinsi Terpilih, 1969/1970-1993/1994 (dalam Rp miliar)

| | Repelita I (1969/70- 1973/74) (Rp miliar) | Repelita II (1974/75- 1978/79) (Rp miliar) | Repelita III (1979/80- 1983/84) (Rp miliar) | Repelita IV (1984/85- 1988/89) (Rp miliar) | Repelita V (1989/90- 1993/94) (Rp miliar) | Total (Rp miliar) | Total (USD jt) ^a |
|----------------------------|--|---|--|---|--|----------------------|--------------------------------|
| Timor Timur | ... | 66.692 | 139.385 | 257.822 | 826.312 | 1.290.481 | 960,2 |
| Nusa Tenggara Timur | 2.223 | 24.788 | 129.296 | 175.199 | 526.309 | 857.815 | 641,2 |
| Nusa Tenggara Barat | 1.728 | 22.826 | 111.765 | 151.629 | 332.782 | 620.730 | 494,7 |
| Papua (Irian Jaya) | 1.469 | 15.825 | 87.388 | 155.224 | 652.353 | 912.259 | 609,5 |

^aKonversi mata uang dihitung dengan nilai tukar rata-rata tahunan IDR:USD selama setiap periode lima tahunan dari masing-masing periode Repelita.

Sumber: Rui Gomes, *East Timor's Socio-Economic Development Under Indonesia, (1976-1998)*, Tesis Doktoral, London South Bank University, 2002, halaman 218.

Tabel 2: Anggaran dan dana Instruksi Presiden (Inpres) yang dialokasikan untuk Provinsi Timor Timur, 1976/77-1992/93

| | Proyek Sektoral (Rp juta) | Anggaran Rutin (Rp juta) | Anggaran Total (Rp juta) ^a | Anggaran khusus baris 16 (Rp juta) | Dana Inpres (Rp juta) | Proyek Sektoral (USD '000) | Anggaran Rutin (USD '000) |
|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1976/77 | 232,8 | 1.475,6 | 1.708,4 | ... | 552,0 | 561,0 | 3.555,7 |
| 1977/78 | 3.500,0 | 3.261,6 | 6.761,6 | ... | 3.359,7 | 8.433,7 | 7.859,4 |
| 1978/79 | 4.333,5 | 3.134,5 | 7.468,0 | ... | 3.997,0 | 8.824,1 | 6.382,6 |
| 1979/80 | 7.517,2 | 3.150,0 | 10.667,2 | 7.000,0 | 5.152,9 | 11.996,8 | 5.027,1 |
| 1980/81 | 12.415,7 | 6.954,4 | 19.370,1 | 6.000,0 | 9.087,5 | 19.801,8 | 11.091,5 |
| 1981/82 | 11.213,2 | 8.435,5 | 19.648,7 | 6.500,0 | 14.884,6 | 17.617,0 | 13.252,9 |
| 1982/83 | 28.220,9 | 8.846,8 | 37.067,7 | angka tidak ada | 19.113,9 | 41.864,6 | 13.123,9 |
| 1983/84 | 22.871,4 | 9.432,1 | 32.303,5 | 7.000,0 | 20.826,0 | 23.257,5 | 9.591,3 |
| 1984/85 | 23.694,8 | 20.015,1 | 43.709,8 | 8.135,6 | 22.940,8 | 22.577,2 | 19.071,0 |
| 1985/86 | 35.181,2 | 13.038,6 | 48.219,8 | 14.147,8 | 24.192,3 | 31.406,2 | 11.639,5 |
| 1986/87 | 25.555,6 | 13.071,3 | 38.626,9 | 7.512,7 | 22.735,2 | 18.116,8 | 9.266,5 |
| 1987/88 | 15.075,7 | 11.218,1 | 26.293,8 | 5.372,6 | angka tidak ada | 9.142,3 | 6.803,0 |
| 1988/89 | 14.285,8 | 11.516,3 | 25.802,1 | 6.379,7 | angka tidak ada | 8.371,4 | 6.748,5 |
| 1989/90 | 18.324,6 | 14.765,2 | 33.089,8 | angka tidak ada | angka tidak ada | 10.253,2 | 8.261,6 |
| 1990/91 | 25.641,3 | 17.037,4 | 42.678,7 | angka tidak ada | angka tidak ada | 13.720,0 | 9.116,3 |
| 1991/92 | 31.351,7 | 18.859,4 | 50.211,1 | angka tidak ada | angka tidak ada | 15.891,2 | 9.559,2 |
| 1992/93 | 40.093,4 | 18.932,6 | 59.026,0 | angka tidak ada | angka tidak ada | 19.674,8 | 9.290,7 |
| Total | 319.508,8 | 183.144,4 | 502.653,2 | angka tidak ada | angka tidak ada | 281.509,5 | 159.640,7 |

^a Dana anggaran negara tambahan disediakan atas instruksi Presiden dengan persetujuan oleh MPR

^b Tidak termasuk Baris 16 (Dana Khusus Timor Timur), yang datanya tidak lengkap.

Sumber: *ibid*

21. Investasi ini memang mengakibatkan pertumbuhan PDB yang pesat setelah operasi-operasi militer besar selesai dan keadaan yang mendekati normal tercipta pada pertengahan 1980-an. Menurut data resmi, PDB tumbuh rata-rata sebesar 8,5% per tahun antara 1984 dan 1997, melampaui pertumbuhan PDB nasional Indonesia dan pertumbuhan PDB di provinsi mana pun (lihat Tabel 5, pada paragraf 26).

Walaupun ada alasan teknis dan politis untuk meragukan kebenaran data tersebut,⁵ secara keseluruhan gambaran yang disajikan mengenai perekonomian Timor-Leste semasa pendudukan cukup meyakinkan. Pertumbuhan digerakkan oleh konstruksi, transportasi, dan komunikasi, serta pelayanan pemerintah, semuanya adalah sektor yang berhubungan dengan konsolidasi pendudukan. Juga terjadi pertumbuhan pesat di sektor perdagangan dan manufaktur, walaupun secara keseluruhan pangsa keduanya rendah, khususnya manufaktur. Sementara sektor pertanian, yang mempekerjakan 84% penduduk pada 1990,⁶ mencatat pertumbuhan terendah di antara sektor-sektor utama lainnya.

Tabel 3: Pangsa sektoral PDB dan tingkat pertumbuhan 1984-1997 (%)

| | Pangsa Sektoral | | | Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan 1984-1997 |
|---------------------------|-----------------|------|------|---|
| | 1984 | 1993 | 1997 | |
| Pertanian | 44,5 | 29,8 | 33,7 | 5,4 |
| Manufaktur | 1,4 | 2,9 | 3,1 | 13,7 |
| Konstruksi | 11,4 | 21,0 | 18,1 | 12,7 |
| Perdagangan | 8,4 | 9,3 | 9,1 | 11,5 |
| Transportasi & komunikasi | 5,4 | 8,6 | 9,7 | 14,9 |
| Pelayanan pemerintah | 21,7 | 21,5 | 19,9 | 8,1 |
| PDB | 92,8 | 93,1 | 93,6 | 11,05 |

Sumber: *ibid*

22. Jelas bahwa dalam masa perang yang paling intensif, antara 1975-1979, kegiatan pertanian hampir sepenuhnya lumpuh. Kemudian, pengekanan banyak penduduk di dalam kamp-kamp 'pemukiman kembali', di mana mereka terus ditahan kadang bahkan sampai akhir dasawarsa 1980-an dan kebebasan bergerak serta kemampuan bertani mereka dibatasi ketat, membuat pemulihan berlangsung sangat pelan (antara 1983 dan 1986, sektor ini tumbuh di bawah 1% per tahun).⁷ Produksi dua bahan pangan utama, jagung dan beras, sampai akhir dasawarsa 1980-an belum pulih ke tingkat produksi masa sebelum perang.⁸

23. Bahkan setelah keadaan mulai kembali normal, kondisi masih belum mendukung untuk pertumbuhan pertanian. Gangguan terhadap pola pemukiman tradisional penduduk pada tahun-tahun awal pendudukan memiliki dampak jangka panjang. Banyak penduduk yang terus dipaksa tinggal di lahan yang dipilih lebih karena alasan keamanan dan bukan karena kesuburannya. Perpindahan penduduk dan ketentuan hukum pertanahan yang baru mengakibatkan ketidakpastian hak atas tanah. Petani dihambat untuk berpindah dari pola pertanian untuk keperluan sendiri ke pola pertanian untuk menghasilkan uang akibat genggamannya

militer dan mitra bisnisnya atas produksi komoditi (lihat khususnya bagian yang berjudul 'Sektor kopi', di bawah, paragraf 27-44).

24. Yang tidak kalah penting, pertanian dirugikan karena tingkat investasi yang rendah. Kurang daripada 10% investasi negara diarahkan ke sektor pertanian, sementara lebih daripada 50% dicurahkan ke dua sektor utama, yaitu transportasi dan komunikasi serta sektor pemerintahan sipil (lihat Tabel 4 di bawah ini). Selain itu, penerima manfaat utama dari investasi di sana mungkin adalah transmigran Indonesia dan sektor perkebunan.⁹

| Tabel 4: Struktur investasi negara per sektor 1984/85-1993/94 (%) | |
|--|---------------------------|
| Sektor | % dari keseluruhan |
| Transportasi & komunikasi | 34 |
| Pemerintahan sipil | 20 |
| Pendidikan & kepemudaan | 11 |
| Pertanian & irigasi | 9 |
| Kesehatan dan kesejahteraan sosial | 5 |
| Subsidi daerah | 5 |
| Pembangunan daerah | 4 |
| Informasi | 2 |
| Agama | 2 |
| Sumberdaya alam & pembangunan | 2 |
| Pertahanan | 2 |
| Industri | 1 |
| Lain-lain | 3 |
| Total | 100 |

Sumber: Gomes, mengutip dari KORPRI Timor Timur, Buku Dua Puluh Tahun Timor Timur Membangun, Dili, 1996, halaman 139.

25. Sebagai akibat dari semua faktor ini, pangsa sektor pertanian dalam PDB cenderung menurun selama sebagian besar masa pendudukan. Penurunan yang demikian bukanlah hal yang tidak biasa dalam perekonomian yang tumbuh pesat, tetapi dalam kasus Timor-Leste ini tidak diimbangi oleh perpindahan tenaga kerja pertanian ke sektor-sektor baru yang lebih dinamis. Sektor manufaktur memang tumbuh dalam periode yang sama (dari 1,3% menjadi 3,1%), tapi pertumbuhan ini tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, di akhir masa pendudukan, hampir tigaperempat dari angkatan kerja tetap berada di pedesaan, hidup dari pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam masa yang sama, jumlah pegawai pemerintah melonjak (dari hanya 780 pada 1981 menjadi 33.602 pada 1997).¹⁰ Bias ini tecermin pada tingkat pertumbuhan untuk

Dili yang jauh melampaui distrik-distrik lain.¹¹ Karena dikucilkan dari sektor-sektor yang lebih dinamis dan dibatasi hanya pada sektor-sektor yang tidak ingin dikembangkan oleh pemerintah, sebagian besar penduduk tidak memetik manfaat dari pertumbuhan ini.

26. Secara khusus, pertanian yang tumbuh lamban dengan produktivitas rendah menjadi sinonim dengan kemiskinan: dalam dasawarsa 1990-an, 85% kepala keluarga yang tergolong paruh termiskin penduduk bekerja di sektor pertanian, sementara lebih daripada 50% dari 20% penduduk yang terkaya bekerja di sektor pemerintah atau sektor formal.¹² Kemiskinan Timor-Leste tidak dapat disalahkan sepenuhnya pada kegagalan Pemerintah Portugis. Setelah menduduki Timor-Leste selama hampir 24 tahun, Indonesia meninggalkan wilayah yang sangat miskin menurut ukuran Indonesia maupun dunia. (Lihat Tabel 5 di bawah ini) Perhitungan dengan menggunakan indikator Timor-Leste untuk mendapatkan nilai Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index) menunjukkan bahwa walaupun tumbuh pesat selama sebagian besar masa pendudukan, Timor-Leste pada 1999 berada di urutan termiskin negara-negara di dunia. (Lihat Tabel 6)

Tabel 5: Indikator Ekonomi Pemanding: Timor-Leste dan Indonesia

| | PDB per kepala sebagai % dari rata-rata Indonesia | Per-tumbuhan rata-rata tahunan, 1983-1996 | Pangsa Sektoral dari PDB | | | Buta huruf (%) | Tingkat Kematian Bayi ^a | Usia Harapan Hidup |
|--------------------|---|---|--------------------------|------------|--------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| | | | Pertanian | Manufaktur | Pemerintahan | | | |
| Timor-Leste | 38,3 | 5,6 | 24,2 | 3,2 | 23,6 | 59,6b | 135,0 | 53,9 |
| NTT | 35,3 | 4,6 | 38,1 | 2,4 | 19,8 | 21,1 | 51,0 | 64,4 |
| NTB | 41,2 | 4,9 | 36,3 | 4,8 | 16,6 | 32,0 | 75,0 | 58,9 |
| Maluku | 67,1 | 4,6 | 26,1 | 18,0 | 10,6 | 6,8 | 47,0 | 65,4 |
| Papua | 167,7 | 4,8 | 18,1 | 4,1 | 6,9 | 32,6 | 51,0 | 64,5 |
| Indonesia | 100,0 | 5,1 | 15,4 | 24,7 | 8,8 | 14,7 | 44,0 | 66,0 |

^aPer 1.000 kelahiran hidup. ^b2001

Sumber: BPS 1999; BPS dan UNDP, 1997; dan UNDP 2001

Tabel 6: Timor-Leste: Indikator Pendapatan dan Kemiskinan 1990-1999

| | 1990 | 1995 | 1996 | 1999 |
|---|------|------|------|------|
| Kemungkinan pada saat lahir untuk tidak mencapai usia 40 tahun (% dari keseluruhan) | 22,7 | 28,5 | 41,1 | 35,6 |
| Tingkat butahuruf orang dewasa (% , usia di atas 15) | 59,8 | 54,7 | 59,6 | 59,6 |
| Berat badan di bawah normal (%) | ... | ... | 49,0 | 45,7 |
| Penduduk yang tidak menggunakan sumber air yang baik (%) | 50,5 | 44,7 | 47,4 | 46,9 |
| Berat badan anak usia di bawah 5 tahun di bawah normal (%) | ... | ... | 50,6 | 44,5 |
| Penduduk yang tidak terjangkau pelayanan kesehatan (%) | 20,3 | 31,1 | ... | ... |
| Nilai Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index) (HPI-1) | 46,4 | 43,0 | 51,0 | 49,0 |
| Penduduk di bawah garis kemiskinan nasional (%) | ... | ... | 41,5 | 42,4 |

Sumber: Gomes, halaman 208, berdasarkan data UNDP dan BPS.

Sektor kopi

27. Kopi adalah sumber pendapatan pajak, devisa luar negeri, dan pendapatan dalam negeri terbesar di Timor-Leste sejak akhir abad ke-19. Saat ini, kopi masih merupakan ekspor utama Timor-Leste (pada 2001 bernilai sekitar USD13 juta, mencakup 75% ekspor),¹³ dan sekitar 44.000 keluarga petani (atau 200.000 penduduk, 25% dari total penduduk) secara langsung bergantung pada kopi sebagai sumber pendapatan mereka.¹⁴

28. Diperkirakan bahwa Portugal membawa kopi ke Timor pada awal abad ke-19. Enam puluh tahun kemudian kopi berkembang menjadi ekspor terbesar Timor-Leste. Mulai 1925, saat harga kopi tinggi dan kehancuran pendapatan kayu cendana yang berharga karena terlalu banyak dipanen, kopi mencakup lebih daripada 80% total ekspor Timor Portugis.* Produksi dan ekspor hasil perkebunan di masa pemerintahan Portugis dikuasai oleh satu perusahaan, yaitu Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho (SAPT). SAPT didirikan pada 1900 oleh gubernur saat itu, José Celestino Da Silva,† yang juga melancarkan perombakan masyarakat pedesaan

* Bahkan pada masa jayanya, kopi hanya memberikan sumbangan sekitar 10,2 juta *escudo* (USD 380.000 pada nilai tukar uang sekarang). Selain itu, harga kopi, seperti juga kebanyakan komoditi kawasan tropis, tidak stabil. Pendapatan dari kopi selalu tidak mencukupi untuk mendanai pemerintah, tetapi merupakan sumber utama pendapatan setempat untuk membiayai wilayah Portugis yang anggaran dananya sangat sedikit. Helio A Estevas Felgas, *Timor Português*, Agência Geral do Ultramar, Lisabon, 1956, dikutip dalam João Saldanha, 1994, halaman 65.

† Da Silva juga tokoh yang unik karena berbagai alasan. Ia memadamkan pemberontakan Dom Boaventura 1911-1912 dan kemudian berupaya menegakkan kekuasaan Portugis dengan merombak struktur-struktur politik lokal. Salah satu inovasinya adalah menciptakan jabatan *chefe de suco*, yang dengan demikian merusak kekuasaan tradisional *liurai* (kecuali yang setia kepada Portugal). Salah satu yang diuntungkan dari perombakan ini adalah perusahaan-perusahaan perkebunan, yang mendapatkan kontrol atas tanah-tanah yang luas.

Timor-Leste agar tanah dan tenaga kerja bisa dibebaskan untuk kepentingan perkebunan (*repopoamento*).¹⁵ Meskipun didirikan sebagai perusahaan swasta, SAPT beroperasi seperti perusahaan negara karena hubungannya dengan gubernur. Dengan menggunakan wewenang dan sumberdaya negara, SAPT merampas tanah-tanah paling produktif di Distrik Ermera untuk perkebunan kopi, dan melaksanakan program tanam paksa, yang diawasi militer.* Pemberontakan-pemberontakan menentang pajak kepala yang terjadi kemudian, dihukum dengan kerja paksa di perkebunan-perkebunan kopi, dan siapa saja yang tidak bisa membayar pajak juga diharuskan menjalani kerja paksa.¹⁶

Manajemen sektor perkebunan kopi masa pemerintahan Indonesia

29. Negara Indonesia mengikuti pola yang telah ditanamkan oleh penguasa kolonial Portugis dengan memberikan tanggung jawab pengelolaan produksi dan perdagangan kopi di tangan perusahaan yang mempunyai hubungan dengan pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai hubungan khusus dengan militer Indonesia, yang memberi mereka kontrol atas perdagangan kopi, dan selanjutnya kontrol atas sektor-sektor yang lain, dengan imbalan 'dana di luar anggaran' untuk keperluan operasi militer dan pemerintah sipil. Sebagai bagian dari pengaturan ini, para petani kecil setempat pemilik kopi tidak bisa mendapatkan penghidupan yang memadai atau menikmati manfaat dari keuntungan besar yang didapat oleh perusahaan-perusahaan perdagangan tersebut, serta oleh militer, perwira tinggi militer, dan pengusaha Indonesia. Bahkan yang lebih parah, dana dari kopi digunakan untuk membiayai operasi militer di Timor-Leste dan represi militer terhadap penduduk setempat.

30. Mayor Jenderal Benny Moerdani, yang sangat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi Indonesia di Timor-Leste sebelum dan sesudah invasi besar-besaran, awalnya sebagai kepala intelijen gabungan dan wakil kepala Bakin dan kemudian dari 1983 sampai 1988 sebagai panglima angkatan bersenjata, menjelaskan dalam sebuah wawancara eksklusif bagaimana ia menjalankan kerjasama dengan pengusaha Indonesia, Robby Sumampouw.¹⁷ Moerdani mengingat bagaimana pada 11 Desember 1975 mereka berdua bertemu di sebuah klub malam di Jakarta untuk membicarakan kesepakatan bisnis, di mana Robby Sumampouw akan memasok makanan dan perlengkapan untuk pasukan invasi dengan imbalan hak untuk menjual kopi yang ketika itu disimpan di Dili. Militer Indonesia menduga bisa cepat memenangi perang di Timor-Leste, dan tidak membuat perencanaan atau anggaran untuk perang yang berkepanjangan.[†]

* SAPT kemudian juga mendirikan anak perusahaan yang mengelola perkebunan cokelat dan karet. SAPT, *Business Plan*, Dili, Agustus 2000, halaman 1.

† Wawancara CAVR, antara lain, dengan mantan Gubernur Timor Timur, Mário Carrascalão, membenarkan bahwa ini adalah pandangan ABRI. Banyak sumber menyebutkan bahwa Indonesia menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa pasukan tentaranya akan "makan pagi di Dili, makan siang di Baucau, dan makan malam di Lospalos", dan selanjutnya ketika menyusut harapan mereka untuk mendapatkan kemenangan cepat, muncul kata-kata lain yang tidak seoptimis yang pertama itu.

Ini adalah operasi yang sangat mahal. Seluruh operasi Timor direncanakan dalam waktu kurang dari satu tahun. Dan Anda tahu sistem anggaran kami. Kami harus merencanakan lima tahun sebelumnya. Jadi kalau kami memulai sesuatu di tengah-tengah Repelita [Rencana Pembangunan Lima Tahun], tidak akan ada uang untuk mendanainya. ABRI berusaha mencari dana dari mana saja. Saya kira orang Barat tidak akan bisa memahami. Jika Anda menceritakan hal ini kepada Sekolah Staf Amerika Serikat, mereka tidak akan mengerti; Sekolah Staf Australia, mereka tidak akan mengerti. Bagaimana bisa memulai suatu operasi tanpa uang? Tetapi kita bisa. Karena kita harus melakukannya.¹⁸

31. Menurut Moerdani, Sumampouw menawarkan untuk mendatangkan peralatan bagi pasukan senilai USD1 juta—meliputi makanan, ban, sepeda motor, dan mobil Land Rover. Moerdani ingat percakapan tersebut seperti ini:

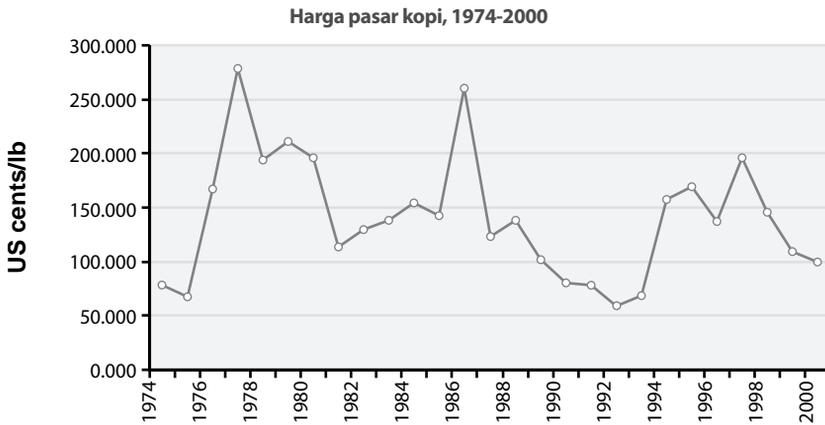
Saya bilang: “Saya tidak punya satu juta dolar untuk membayar kamu.” Tidak, mereka [Sumampouw dan rekan-rekan usahanya] tidak berkeberatan. [Mereka jawab] “Kami tahu di Timor Timur ada banyak kopi, mungkin 5.000-6.000 ton... Baik, kami kirim satu kapal penuh perlengkapan dan barang-barang lain sebelum Natal. Dan setelah kami turunkan muatannya, kami memuat kopi sebanyak mungkin. Dan kami berlayar ke Singapura untuk menjualnya... Jika hasil penjualan lebih dari USD1 juta, kami hanya akan mengambil satu juta dolar pembayaran semua barang tersebut. Jika kurang dari satu juta dolar, Anda tidak perlu membayar lagi.” Saya bilang: “Sangat dermawan! Bagaimana saya bisa membalas kebaikan ini?” “Tidak, kami hanya ingin berbuat sesuatu untuk membantu pemerintah.” Saya bilang, baik. Jadi, begitulah awalnya.¹⁹

32. Jadi, kesepakatan untuk membangun sebuah usaha terbesar di Timor-Leste telah dicapai di Jakarta, hanya empat hari setelah invasi Indonesia terhadap Dili.

33. Setelah barang-barang tersebut tiba di Dili, Moerdani mengenalkan Sumampouw kepada Kolonel Dading Kalbuadi, yang waktu itu menjabat sebagai Asisten Intelijen Komando Tugas Gabungan (Kogasgab) Timor Timur dan Arnaldo dos Reis Araújo, Gubernur Timor Timur yang diangkat oleh penguasa Indonesia. Kedua orang tersebut setuju untuk memberikan kontrak selama 20 tahun kepada Sumampouw untuk membeli kopi Timor-Leste dan menjualnya ke luar negeri. Sebagai imbalan, Sumampouw akan menyediakan perbekalan militer secara berkelanjutan.²⁰ Sumampouw dan saudaranya Hendro mendirikan PT Denok Hernandes Internasional Indonesia sebagai pembeli dan pengeksport tunggal kopi Timor-Leste.

Nilai sektor kopi

34. Di masa pendudukan Indonesia, kopi lebih menguntungkan dibanding masa Portugis. Untuk sebagian besar masa pendudukan harga kopi cukup tinggi (terutama 1977 dan 1986) dan produksi kopi meningkat menjadi lebih daripada 13.000 ton. Kesepakatan itu tampaknya sangat menguntungkan Sumampouw dan jenderal-jenderal ABRI. Pengapalan perbekalan militer dari Sumampouw tiba 23 Desember 1975. Pada 1976, harga kopi melambung dan mencapai nilai tertinggi (lihat Bagan 1 dan Tabel 7).



Sumber: www.imfstatistics.org

35. Komisi hanya berhasil mendapatkan sumber-sumber yang menyebutkan penjualan dua pengapalan kopi, yang pertama 500 ton dan kedua 800 ton, dengan nilai jual di Singapura seluruhnya sebesar USD3,1 juta (USD 1,27/lb).²¹ Tidak diketahui kapan sisa kopi yang tersimpan di gudang di Dili dijual dan berapa harga jualnya, dan apakah keuntungannya masuk ke kantong Robby Sumampouw atau ABRI di Timor-Leste atau keduanya. Namun, menurut ingatan Moerdani mengenai kesepakatannya dengan Sumampouw, sejak pertengahan 1976, penjualan sebagian cadangan kopi Timor-Leste itu mendatangkan dana sebesar USD2,1 juta yang digunakan untuk mendanai operasi ABRI saat melakukan operasi ke pedalaman Timor-Leste (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik, segmen berjudul Operasi Seroja, 1976-1979). Jika Sumampouw bersaudara menjual cadangan yang tersisa dengan harga yang sama dengan penjualan yang pertama, keuntungan totalnya mencapai USD14 juta.

36. Memperkirakan dengan tepat keuntungan dari penjualan kopi adalah perhitungan yang rumit karena beberapa faktor, antara lain: harga kopi yang naik-turun di pasar internasional, perbedaan harga yang dibayarkan kepada petani dan harga indikator internasional, tidak adanya catatan yang sistematis tentang harga

* Statistik IMF mengutip harga pasar kopi 1976 sebesar USD1,67/lb.

dari petani di Timor-Leste dan Timor Barat, dan fluktuasi mata uang. Karena itu, data yang dikutip di sini tentang harga yang dibayarkan kepada petani di Timor-Leste dan perbandingannya dengan harga di Timor Barat (lihat Tabel 7, paragraf 38) hanya merupakan petunjuk.

37. Pada 1977 harga kopi di pasar internasional mencapai tingkat tertinggi (lihat Bagan 1 paragraf 34 dan Tabel 7 paragraf 38). PT Denok berada dalam posisi tepat untuk memanfaatkan naiknya harga kopi di pasar internasional. Ketika harga kopi turun lagi pada 1978-1979, posisi Sumampouw sudah kuat sehingga bisa memperluas jaringan usahanya di Timor-Leste ke sektor-sektor lain yang menguntungkan. Ketika monopoli kopi PT Denok akhirnya dipatahkan pada 1992 setelah Pembantaian Santa Cruz, atas tekanan dari para Senator Amerika Serikat, Moerdani sudah bukan lagi panglima angkatan bersenjata dan harga kopi jatuh ke tingkat yang paling rendah dalam waktu 30 tahun. Karena itu, akhir dari monopoli ini merupakan konsesi yang relatif murah kepada masyarakat internasional, dan memberi kesempatan kepada mereka yang sudah mengambil keuntungan dari perdagangan kopi untuk sejak itu berkonsentrasi pada monopoli yang lebih menguntungkan di bidang konstruksi dan impor-ekspor.²²

38. Petani kopi Timor tidak pernah menikmati keuntungan yang didapat Sumampouw dan para jenderal ABRI. Setiap tahun pemerintah setempat mengeluarkan peraturan yang menentukan harga yang harus dibayarkan kepada petani.* Pada 1983, harga ini hanya seperenam dari harga yang dibayarkan di Timor Barat, sehingga petani Timor-Leste merugi USD2,50 untuk setiap kilogram.† Ini berarti bahwa pada 1983, bahkan saat harga pasar internasional tidak terlalu tinggi, PT Denok mendapatkan keuntungan sebesar USD18 juta dari pembelian kopi dari petani dengan harga rendah.

Tabel 7: Harga kopi dan produksi 1975-1993

| Tahun | Produksi (ton) | Harga yang dibayar ke petani (Rp/kg) | Indikator harga pasar internasional (Rp/kg) | Sumber harga Timor-Leste |
|-------|----------------|--------------------------------------|---|---|
| 1975 | 4.585 | angka tidak tersedia | 621 | Tidak ada catatan harga, meski sebagian sumber melaporkan bahwa kopi ditukar dengan beras pada awal invasi. |
| 1976 | 2.510 | angka tidak tersedia | 1.525 | ...harga tidak tersedia |
| 1977 | 5.597 | angka tidak tersedia | 2.538 | ...harga tidak tersedia |

* Gubernur mengeluarkan surat keputusan mengenai tata niaga kopi. Surat keputusan terakhir dikeluarkan pada 1993 ketika monopoli dihapuskan. Wawancara CAVR dengan Sam Filliaci, Yogyakarta, Indonesia, 9 Juli 2004.

† Satu delegasi Senat Australia ke Timor-Leste diberi tahu bahwa PT Denok membayar petani produsen kopi Rp500/kg. (atau USD50 sen) ketika harga pasar dunia mencapai Rp3000/kg. "Official Report of the Australian Parliamentary Delegation to Indonesia July-August 1983, Australia," halaman 175 dan 184.

| | | | | |
|------|--------|----------------------|-------|---|
| 1978 | 3.547 | angka tidak tersedia | 1.887 | ...harga tidak tersedia |
| 1979 | 2.968 | angka tidak tersedia | 2.892 | ...harga tidak tersedia |
| 1980 | 4.600 | 100 – 300 | 2.704 | Wawancara CAVR dengan Idelfonso (petani kopi Fatubessi dan mantan pegawai PT Salazar); dengan Chung Ki Seng (alias Asengko, pedagang kopi). |
| 1981 | 8.999 | 150 – 350 | 1.571 | Berkas ACFOA, 9 Maret 1982, wawancara konfidensial dengan mantan sopir PT Denok di Ermera dan Dili sampai Desember 1981. Juga melaporkan bahwa tentara menjual dengan harga Rp1.500/kg. |
| 1982 | 8.009 | 375 | 1.892 | Delegasi Senat Australia, 1983 halaman 175. |
| 1983 | 7.240 | 500 | 2.761 | Delegasi Senat Australia, 1983 halaman 175, 184. |
| 1984 | 6.091 | angka tidak tersedia | 3.476 | ...harga tidak tersedia |
| 1985 | 8.275 | 500 | 3.469 | Wawancara CAVR, Idelfonso |
| 1986 | 9.572 | angka tidak tersedia | 7.336 | ...harga tidak tersedia |
| 1987 | 9.448 | 800 – 1.500 | 4.448 | Wawancara CAVR, Arcanjo da Silva (Proyek Rehabilitasi Kopi 1987-1992). Juga melaporkan bahwa harga dasar petani di Denpasar dan Sulawesi adalah Rp7.000/kg. |
| 1988 | 9.428 | 1.200-1.500 | 5.119 | <i>Tempo</i> , 9/3/1988, halaman 33. Juga melaporkan bahwa harga grosir di Atambua ialah Rp4.000/kg. |
| 1989 | 7.497 | 2.000 | 3.972 | Wawancara CAVR dengan Manuel Babo (petani kopi di Aifu, Ermera). Juga melaporkan bahwa harga di Atambua Rp 6.000/kg belum dikurangi pajak dan uang suap. |
| 1990 | 7.348 | 4.000 | 3.243 | Wawancara CAVR, Idelfonso |
| 1991 | 10.508 | 1.100-1.200 | 3.346 | Mubyarto, et al., East Timor: The Impact of Integration |
| 1992 | 13.288 | angka tidak tersedia | 2.635 | ...harga tidak tersedia |
| 1993 | 7.734 | 800-1.100 | 3.122 | Wawancara CAVR, Sam Filliacci (mantan direktur NCBA, Dili) |

Sumber data produksi: 1975-1980 Saldanha; 1983 Soesastro; 1981-1982, 1984-1993 Timor Timur dalam Angka. Sumber harga pasar internasional: www.imfstatistics.org

39. Komisi menerima berbagai laporan mengenai adanya campurtangan militer Indonesia dalam produksi dan perdagangan kopi untuk melindungi posisi istimewa PT Denok.* Petani melaporkan bahwa prajurit bersenjata menjaga kopi, dan bahwa kendaraan militer sering digunakan untuk mengangkut kopi. Pengangkutan kopi (di atas beberapa kilogram untuk keperluan pribadi) selain oleh PT Denok dilarang keras, dan bisa dihukum dengan penyitaan atau bahkan hukuman penjara. Beberapa pedagang lepas orang Cina masih bisa tetap beroperasi. Sebagian beroperasi sebagai pembeli lokal untuk PT Denok; yang lainnya tidak mempunyai izin tetapi menyuap agar bisa pergi ke Atambua untuk menjual kopi dengan harga lebih tinggi.²³

40. Walaupun pada awalnya tentara membutuhkan bantuan Sumampouw untuk menyediakan perbekalan untuk operasi-operasinya, pada tahun-tahun belakangan pangsa keuntungan militer dari penjualan kopi PT Denok dipergunakan terutama untuk memperkaya sejumlah kecil pejabat tertinggi. Mantan gubernur Mario Carrascalão menceritakan bagaimana keuntungan PT Denok dialihkan:

Ada yang namanya itu Dana 'Fee Kopi'. Kopi itu dibeli dari rakyat dengan harga Rp150, Rp200, Rp300 [tiap kilogram]. Ada satu 'fee' yang diberikan kepada Muspida Tingkat I, II, kepada Tripika...ada dana sekitar Rp3 miliar [dari "fee" ini] untuk Muspida Tingkat I agar saya bisa mengizinkan pembagiannya kepada Gubernur, Danrem, Jaksa Tinggi.²⁴

41. PT Denok adalah anak perusahaan Batara Indra Group yang mencakup sepuluh anak perusahaan monopoli lainnya, termasuk PT Salazar (yang oleh gubernur diberi hak kepemilikan 11.000 hektar perkebunan kopi yang diambil alih dari SAPT), PT Scent Indonesia (pembeli dan eksportir tunggal kayu cendana), PT Watu Besi Raya (kontraktor tunggal untuk konstruksi bangunan), dan PT Marmer (pemegang tunggal hak tambang marmer).²⁵ Karena besarnya dana yang dialokasikan ke Timor-Leste untuk pembangunan infrastruktur, monopoli atas kontrak-kontrak ini pasti sangat menarik. Karena itu, PT Denok juga mendirikan PT Gunung Kijang dan Bakti Timur Karya (BTK) untuk bergerak di bidang konstruksi bangunan. Pada zaman Indonesia, kedua perusahaan tersebut memonopoli banyak proyek konstruksi dan saat ini kembali melakukan bisnis di Timor-Leste. Perusahaan-perusahaan monopoli memunculkan kepentingan ekonomi yang kuat untuk mempertahankan kontrol militer di Timor-Leste.

* Pengambilalihan tanah luas untuk perkebunan kopi membuat PT Denok mendapatkan kontrol atas pembelian dan penjualan produk ini, meskipun 60% kopi tetap berasal dari petani kecil. Koperasi yang dibentuk oleh negara, KUD (Koperasi Unit Desa), resminya menjadi pembeli, yang selanjutnya memasok PT Denok, eksportir tunggal kacang hijau. Namun demikian, wawancara-wawancara menunjukkan bahwa koperasi ini nyatanya hanya berfungsi memberi cap pengesahan penjualan dari petani, dan PT Denok sesungguhnya membeli kopi secara langsung atau melalui pedagang lepas.

Keterlibatan militer dalam perekonomian Timor-Leste

42. Bisnis militer Indonesia bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di Timor-Leste—pengumpulan “kutipan” dan pemberian izin oleh militer untuk hak eksklusif atas pengambilan sumberdaya merupakan bagian dari korupsi luas yang menjadi ciri pemerintahan Soeharto. ‘Dwifungsi militer’ dalam pemerintahan dan pertahanan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrol otoriter pemerintah Orde Baru dan karena itu memberi peluang luas bagi militer untuk mengembangkan bisnis.²⁶

43. Namun, tingkat penguasaan militer di Timor-Leste selama pendudukan sangat tidak lazim bahkan untuk ukuran pemerintah Orde Baru (lihat Bagian 4: Rezim Pendudukan). Militer menduduki jabatan penting dalam pemerintah sipil, terutama pada tahun-tahun awal pendudukan, dan ini memberi kepada militer kontrol atas kegiatan ekonomi dan komersial di Timor-Leste dan kekuasaan untuk melindungi bisnis-bisnis yang berkaitan dengan militer dan jaringan perlingkungannya (lihat Bagian 4, segmen 4.2: Pemerintah Sipil):

Kepala dan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menduduki posisi strategis dari mana mereka bisa mengendalikan pemanfaatan sumberdaya dan menjamin agar hasil dari proyek-proyek dibagikan “secara merata” kepada para pejabat militer, pejabat sipil, dan perusahaan-perusahaan di Timor-Leste dan Jakarta. Menurut peraturan, semua proyek bernilai di atas Rp500 juta harus diberikan kepada perusahaan di Jawa karena perusahaan Timor-Leste tidak bisa menyediakan modal awal yang diperlukan. Bappeda mempunyai wewenang mengalokasikan proyek-proyek ini.²⁷

44. Sementara hukum perang internasional mengizinkan penguasa pendudukan untuk menguasai atau memanfaatkan sumberdaya setempat untuk mendanai pendudukan, perampokan yang dikontrol oleh militer terhadap komoditi Timor-Leste yang paling menguntungkan itu hanya memperkaya para pejabat militer dan sipil yang menduduki jabatan dan mempunyai wewenang untuk melindungi investasi semacam ini. Mengingat luasnya jaringan patronase dan tingkat korupsi di wilayah ini, tidaklah kredibel untuk mengatakan bahwa kontrol militer atas pengelolaan perekonomian dan sumberdaya Timor-Leste dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pendudukan.

Hak rakyat untuk menggunakan sumberdaya alam

45. Selain mengontrol kopi, militer juga terlibat dalam perampasan sumberdaya alam lain yang berharga di Timor-Leste termasuk kayu cendana, hutan, dan minyak.

Kayu Cendana

46. Kayu cendana wangi Timor-Leste yang sangat berharga adalah komoditi yang awalnya menarik perhatian para pedagang dan pemerintah-pemerintah Eropa yang membiayai mereka pada awal abad ke-16, dan berperan sentral dalam penyusunan

kekuasaan di negara jajahan ini dan antara kekuatan Portugis, Belanda, dan Inggris yang bersaing untuk menguasai kawasan ini. Portugal menebang pohon cendana tanpa henti, akar dan semuannya, dan produksi jatuh dari hampir 900 ton pada 1910 menjadi 20 ton pada 1926, ketika ekspor kayu cendana secara resmi dilarang, untuk memberi kesempatan cendana agar tumbuh kembali.²⁸

47. Setelah invasi Indonesia, kayu cendana kembali dipanen pada tingkat yang membuatnya terancam punah, baik langsung oleh militer atau atas perintah mereka. Penelitian Komisi menemukan kasus-kasus personel militer memerintahkan penduduk setempat untuk menebang pohon cendana semua ukuran, termasuk mengambil akar-akarnya.²⁹ Baik ditebang oleh atau untuk militer, kayu cendana dijual terutama melalui pedagang-pedagang lepas pada tahun-tahun awal invasi. Pada Oktober 1979, penebangan kayu cendana diresmikan dengan memberikan hak ekspor eksklusif kepada anak perusahaan Batara Indra Group milik Robby Sumampouw, PT Scent Indonesia. Pada 1982, 240 ton kayu dan minyak cendana diekspor, meningkat menjadi 328 ton pada 1986. Namun, karena pohon kayu cendana semakin jarang, hasil panen menurun sampai mencapai titik terendah, yaitu kurang daripada 150 ton pada 1988, kurang daripada 60 ton pada 1990, dan 11 ton pada 1991.³⁰

Hutan

48. Ciri khas pengalaman Timor-Leste, mencakup iklim yang keras dan tidak menentu serta gelombang kekerasan dan kekacauan yang kerap terjadi, membuat hutan memiliki nilai khusus, baik sebagai sumber bahan makanan pada masa paceklik atau sebagai tempat berlindung pada saat terjadi kekacauan. Kayu juga merupakan sumber bahan bakar utama, sementara tanaman hutan digunakan untuk bahan obat tradisional.³¹ Pada 1999, Panel Antar-Pemerintah PBB bidang Perhutanan menyusun sebuah konsep rasio hutan per kapita untuk menarik perhatian dunia pada pentingnya peran hutan bagi masyarakat agraris. Suatu masyarakat dengan rasio 0,01 ha per orang dianggap sebagai penduduk berisiko karena warganya tidak bisa memanfaatkan hutan untuk menopang kehidupan mereka. Para peneliti menemukan bahwa pada 1999, sebagian besar wilayah Timor-Leste berada pada ambang risiko tinggi.³²

49. Besarnya penebangan hutan selama pendudukan Indonesia dapat dibuktikan dengan analisis dua foto satelit independen, yang menunjukkan kemerosotan tajam hutan selama masa pendudukan, terutama di distrik-distrik bagian barat.* Penggundulan hutan terbesar, yang di beberapa tempat mencapai 96%, terjadi di Oecussi, Dili, Bobonaro, Liquiçá, Ermera, Lautém, Manatuto, dan Covalima.

* George Bouma dan Helena Koryn, "Changes in Vegetation Cover in East Timor (1989-1999)" *Natural Resources Forum*, vol. 28, 2004, halaman 1-12; Lars Erikstad, Vegar Bakkestuen, dan Odd Terje Sandlund, "Deforestation in East Timor since 1972 as indicated by LANDSAT imagery," Lampiran 6 pada Sandlund et al, 2001. Penyempitan areal hutan antara 1972 dan 1999, yang diukur dengan penginderaan jarak jauh, juga dipertegas oleh Erikstad et al. Tetapi, tutupan tumbuh-tumbuhan tidak dibagi menjadi hutan lebat, hutan, dan padang, seperti dalam penelitian Bouma dan Koryn.

Data ini tidak memberikan penjelasan mengenai sebab hilangnya hutan, tetapi faktor utamanya mungkin adalah:

- Meningkatnya tekanan terhadap lahan hutan karena berbagai sebab, termasuk penebangan untuk keperluan pertanian dan kayu bakar serta untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk karena pertumbuhan alami dan karena masuknya pendatang, baik sebagai transmigran atau pemindahan paksa penduduk ke desa-desa “binaan” sepanjang perbatasan karena alasan “keamanan”;³³
- Penebangan kayu komersial (termasuk kayu jati, kayu hitam, kayu cendana), baik yang mendapat izin maupun tidak, untuk diangkut melintasi perbatasan. Seperti juga di Indonesia, karena penggunaan alat-alat berat untuk menebang kayu dan pengangkutan kayu mudah diawasi, penebangan liar tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang tidak mungkin terjadi;
- Dalam skala yang lebih kecil, penebangan hutan untuk pembukaan perkebunan-perkebunan baru;^{*}
- Penggunaan napalm oleh militer pada dasawarsa 1970-an.

50. Hilangnya hutan membatasi kemampuan masyarakat di desa-desa untuk dapat hidup sejahtera, antara lain karena:

- Hilangnya akses terhadap hasil hutan seperti kayu bakar, sayuran, makanan ternak, dan tanaman obat-obatan;
- Penurunan kualitas tanah, yang mengakibatkan penurunan kesuburan;
- Penurunan stabilitas tanah, dengan peningkatan erosi dan kemungkinan tanah longsor pada lereng-lereng yang curam;
- Pemadatan tanah dan hilangnya kapasitas tanah untuk menahan air, yang mengakibatkan berkurangnya air tanah dan ketersediaan air, dan meningkatnya kemungkinan banjir;
- Hilangnya kesempatan untuk mendapatkan nafkah dari penebangan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan untuk keperluan komersial.

51. Komisi tidak menemukan adanya tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi hutan di Timor-Leste dari penebangan ilegal atau eksploitasi yang merusak.

Laut Timor

52. Kekayaan ekonomi utama di Timor-Leste adalah celah lautan antara Timor dan Australia yang mempunyai kandungan minyak yang kaya. Belum dieksplorasi sampai awal dasawarsa 1970-an, sumber alam ini akan memberikan sumbangan besar pada perekonomian Timor-Leste.[†] Tapi, kandungan minyak dan gas alam yang

* Luas perkebunan bertambah dari 3% menjadi 5% antara 1989 dan 1999, dan luas hutan/kopi meningkat dari 6% menjadi 7%.

† Meskipun tidak ada eksplorasi sampai awal dasawarsa 1970-an, potensi minyak ini merupakan pen-

kaya di Laut Timor memainkan peran utama dalam perjuangan untuk kedaulatan Timor-Leste. Posisi Australia dan Portugal tentang hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri dan tentang pendudukan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi mereka di Laut Timor (lihat Bab 7.1: Hak Penentuan Nasib Sendiri). Ladang minyak dan gas alam di Laut Timor disebutkan di sini karena menggambarkan bagaimana kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan sumber alam yang berharga ini memengaruhi sikap pelaku-pelaku internasional mengenai hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri dan kondisi ekonomi rakyat Timor-Leste serta kemampuan mereka untuk menghidupi diri.

53. Perjanjian 1989 antara Australia dan Indonesia membagi Laut Timor ke dalam zona-zona ekonomi eksklusif milik Indonesia dan Australia serta satu Wilayah Pengembangan Minyak Bersama. Perjanjian ini juga menetapkan bahwa produksi ladang-ladang tersebut dibagi dua antara Australia dan Indonesia dengan pembagian yang secara tidak lazim menguntungkan Australia. Pertimbangan politik hampir pasti telah memengaruhi isi kesepakatan ini: Australia memetik keuntungan karena menjadi salah satu dari sedikit negara yang memberikan pengakuan *de jure* pada pencaplokan Timor-Leste oleh Indonesia.

Hak untuk mendapatkan makanan

54. Semua orang memiliki hak mendasar untuk hidup bebas dari lapar. Dalam mewujudkan hak ini, negara memiliki kewajiban minimum untuk menjamin bahwa semua orang punya akses ke bahan makanan pokok. Kewajiban ini mencakup langkah-langkah untuk:

Memperbaiki metode-metode produksi, pengawetan, dan distribusi makanan... [antara lain] dengan mengembangkan atau memperbarui sistem-sistem pertanian sedemikian rupa sehingga bisa mencapai perkembangan dan penggunaan sumberdaya alam yang paling efisien. (KIHESB, Pasal 11[2][a])

55. Kemiskinan yang luas dan faktor iklim membuat bercocok-tanam bahan makanan selalu sulit di wilayah ini. Kemarau El Niño yang berkala adalah sebuah kenyataan hidup dan kekurangan makanan musiman (yang biasanya berlangsung selama 2-3 bulan dalam setahun) merupakan hal rutin yang menyebabkan orang-orang hidup di ambang batas kekurangan gizi. Di awal dasawarsa 1970-an, populasi manusia dan hewan ternak telah memberi tekanan berat terhadap lahan di beberapa daerah. Namun, betapapun rentan keberadaan mereka, penduduk setempat telah mengembangkan cara-cara untuk meringankan risiko dan melalui periode-periode paceklik ini.³⁴ Bahkan setelah terganggunya pasokan bahan makanan menyusul terjadinya perang saudara di 1975, ketua delegasi ICRC untuk Timor-Leste dengan tegas menyangkal adanya kelaparan di

.....
dorong dilakukannya perundingan perbatasan antara Australia dan Portugal pada 1953. J.R.V. Prescott, "The Australian-Indonesian Continental Shelf Agreements," *Australia's Neighbors*, vol. 82 (September-Oktober 1972), halaman 1-2, dikutip dalam Jolliffe, halaman 58.

kawasan ini. Ia menggolongkan keadaan setelah terjadinya perang saudara ini sebagai “ketegangan pangan”, bukan kelaparan, karena adanya embargo terhadap pengiriman pasokan (khususnya bahan makanan dan bahan bakar minyak)” dan kondisi kemiskinan serta kesehatan yang buruk yang sudah ada sebelumnya.

56. Seperti tampak dalam Tabel 4 pada paragraf 24 di atas, hanya 9% dari investasi negara yang masuk ke sektor pertanian pada periode 1984/85-1993/94, suatu angka yang rendah mengingat sebagian sangat besar penduduk sumber penghidupannya ada pada pertanian. Pada periode yang sama pangsa pertanian dalam PDB merosot dari 44,2% menjadi 29,8% (lihat Tabel 5 pada paragraf 26). Seperti sudah dibahas sebelumnya (lihat paragraf 25, di atas), menurunnya pangsa pertanian dalam PDB bisa jadi merupakan tanda perubahan ekonomi yang sehat. Namun, dalam konteks Timor-Leste, di mana pertanian tetap merupakan sumber lapangan kerja yang utama, dengan produktivitas luarbiasa rendah, dan dampak pertumbuhan PDB terhadap lapangan kerja di sektor-sektor lain sangatlah rendah, penurunan ini bukan merupakan tanda perubahan ekonomi yang sehat.

57. Dari seluruh tanah yang bisa diolah, hanya 10% yang dimanfaatkan untuk pertanian, terutama karena adanya kebijakan keamanan yang membatasi pergerakan penduduk maupun karena konflik seputar kepemilikan tanah (dibahas pada paragraf 62 – 72, 143). Penerima manfaat utama dari investasi di bidang pertanian adalah para transmigran Indonesia, bukan penduduk pribumi.³⁵ Investasi yang ditujukan bagi para petani Timor-Leste tidak efisien. Sarana irigasi yang dibangun oleh Indonesia, misalnya, bersifat “sangat sementara dan tidak efektif”.³⁶ Karena kurangnya petugas penyuluhan, keterampilan-keterampilan teknis tidak bisa ditularkan. Penggunaan masukan seperti pupuk, yang seharusnya bisa menaikkan produktivitas, berjalan tak teratur.³⁷ Akibatnya, tingkat kemiskinan dan kekurangan gizi yang sangat parah dijumpai di kawasan perdesaan.³⁸

58. Selain kegagalan Indonesia dalam hal ini, dampak pendudukan Indonesia pada pertanian subsisten yang paling parah ditimbulkan oleh langkah-langkah keamanan yang langsung menyebabkan kelaparan yang parah dan kematian ribuan orang. Penting ditegaskan kembali hal yang telah diuraikan dalam Laporan ini (lihat Bab 7.3: Pemandahan Paksa dan Kelaparan) bahwa sebelum invasi Indonesia, betapapun buruknya situasi kesehatan dan kemiskinan setelah berabad-abad ditelantarkan oleh pemerintah Portugis, tidak pernah ada laporan tentang kelaparan pada tingkat yang pernah terjadi di masa pendudukan, walaupun penduduk telah beberapa kali mengalami kekurangan pangan yang parah pada 1964 dan 1970. Setelah invasi Indonesia, pemindahan orang dalam skala luas, berulang-ulang, dan dalam waktu lama, serta pembatasan pertanian, yang merupakan taktik yang disengaja dan sekaligus akibat sampingan dari pendudukan Indonesia, secara berat mengacaukan pertanian dan manajemen lahan yang telah mapan.

.....
* Perwakilan Oxfam Adrian Harris menyatakan dalam korespondensi bulan Oktober 1975 dari Community Aid Abroad Australia kepada Oxfam, England, bahwa Indonesia telah memblokir perbatasan sebagai taktik yang disengaja untuk menimbulkan kekacauan yang dijadikan sebagai pembenaran untuk intervensi. Submisi kepada CAVR dari Community Aid Abroad, Kantor Nasional, Melbourne, Australia.

59. Seseorang menceritakan kepada Komisi tentang kondisi di Iliomar setelah ia dan teman-temannya sedesa dikurung di ibukota subdistrik (*posto*) setelah menyerahkan diri:

Karena perintah-perintah dari TNI ini, orang-orang tidak bisa bergerak samasekali. Karena dilarang keras pergi keluar kamp untuk mencari makanan, orang-orang mulai mengalami kelaparan luarbiasa di posto Iliomar. Kami baru saja turun dari Matebian, jadi kami tidak punya makanan dan tidak mendapat kesempatan untuk mengolah sawah. Sehingga tidak ada makanan sama-sekali di posto. Untuk bertahan hidup, setiap orang mulai memakan buah kelapa yang ada di sekitar kamp — kelapa yang muda, tapi juga yang sudah tua dan kering, bahkan juga memakan kelapa yang masih sangat muda dan belum matang.

Setelah beberapa waktu, karena ribuan orang memakan buah kelapa, maka pohon-pohon kelapa itu serentak berhenti berbuah. Kemudian kami mulai memakan akar-akaran dan daun-daunan dari pohon-pohon liar, dan banyak orang jatuh sakit. Setiap hari 2-3 orang mati karena lapar, kadang-kadang 40-50 orang mati dalam satu minggu saja. Untuk bertahan hidup, orang-orang memakan jenis makanan yang biasa dimakan babi. Mereka menebang pohon pisang, mengupas lapisan luarnya, dan memasak bagian dalamnya. Ini menyebabkan banyak orang menjadi sakit kolera dan beri-beri. Setelah memakan bagian dalam batang pisang, sekitar 5-10 orang mati setiap hari. Jadi, saya kira lebih dari 200 orang mati karena kelaparan pada periode itu, karena setiap hari kami bisa mendengar orang-orang saling berbicara mengatakan ada satu orang mati di sini, ada satu orang lagi mati di sana.³⁹

60. Satu sumber mengutip Monsignor Martinho Da Costa Lopes, Administrator Apostolik Dili (sebelum pemecatannya pada 1983):

Kalau saja Indonesia memperbolehkan orang Timor-Leste untuk bergerak bebas dan tinggal di mana pun yang mereka sukai, tidak akan terjadi kekurangan pangan. Tentu saja produksi bahan makanan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim. Namun, masalahnya ialah bahwa rakyat dipaksa untuk tinggal di tempat-tempat pemukiman dan tidak diizinkan keluar... inilah penyebab utama mengapa orang-orang tidak bisa menanam cukup tanaman bahan makanan.⁴⁰

61. Ada bukti bahwa Indonesia menolak memberikan bantuan pangan dan obat-obatan kepada daerah-daerah yang “bergolak”, karena menganggap bahwa bantuan itu pada akhirnya akan jatuh ke tangan gerakan resistansi.⁴¹ Juga ada laporan-laporan tentang militer yang mengalihkan bahan makanan, obat-obatan,

dan pakaian yang dimaksudkan sebagai bantuan, untuk mereka gunakan sendiri atau dijual di toko-toko.⁴² Pejabat-pejabat militer dan pemerintah setempat juga dilaporkan telah menggunakan bantuan dengan cara yang diskriminatif untuk membujuk para pengungsi agar masuk agama Islam atau Protestan, atau untuk menarik para perempuan yang putus asa ke dalam perbudakan seksual.⁴³

Akibat ekonomi dan sosial dari 'kamp pemukiman kembali'

Kehidupan sehari-hari di bawah Portugal dan Indonesia mungkin saja rentan dan tidak sehat, tetapi kehidupan jauh lebih buruk lagi di kamp, desa, dan tempat-tempat ratusan ribu orang dipaksa bermukim oleh militer Indonesia dalam berbagai masa selama pendudukan. Kondisi di kamp-kamp ini sangat buruk: rumah-rumahnya primitif dan para penghuni tidak punya akses ke fasilitas sanitasi ataupun kesehatan. Tujuan pembangunan kamp-kamp ini adalah untuk mengisolasi gerakan resistansi dari penduduk sipil. Ini hendak dicapai dengan cara menempatkan penduduk di bawah kontrol militer yang ketat, atau dengan memindahkan mereka menjauh dari tempat-tempat gerakan resistansi masih bertahan. Penduduk dipindahkan secara paksa ke permukiman yang terletak di dataran yang lebih rendah, tempat mereka lebih mudah diawasi. Mayoritas penduduk sejak dulu tinggal di dataran tinggi untuk menghindari malaria yang mewabah di dataran rendah.⁴⁴ Karena itu, kamp-kamp ini menghadapkan sejumlah besar penduduk sipil yang sudah lemah terhadap risiko kesehatan yang parah. Buruknya kondisi kesehatan di kamp-kamp itu, dan kebijakan retrogresif penguasa pendudukan untuk mempertahankan kamp-kamp ini tanpa menyediakan layanan kesehatan bagi para tahanan adalah jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan.

Suatu jenis kamp pemukiman yang lain digunakan untuk menahan ribuan orang sipil dan pejuang Falintil yang melarikan diri setelah invasi dan kemudian menyerah atau tertangkap. Orang-orang ini ditahan dengan jangka waktu yang berbeda-beda, mulai dari beberapa bulan sampai bertahun-tahun dengan tujuan terangnya terangan untuk memutus jalur dukungan kepada anggota-anggota resistansi yang belum menyerah.⁴⁵ Saat keluar dari persembunyian, mereka sudah dalam keadaan kekurangan gizi yang parah; setelah menjadi tawanan di kamp-kamp mereka mendapat ransum yang sangat sedikit, itupun kalau ada.* Mereka juga dilarang berjalan

* Banyak laporan mengenai ratusan orang yang meninggal setelah makan ikan asin yang diberikan

keluar kamp melebihi jarak tertentu yang tidak jauh, sehingga sangat membatasi kebebasan mereka untuk bercocok-tanam ataupun mencari makanan. Kamp-kamp ini dijaga ketat di semua sisinya untuk mencegah kontak dengan para gerilyawan. Tawanan yang meninggalkan kamp untuk keperluan apapun, termasuk untuk mencari makanan, menghadapi risiko ditembak oleh para penjaga karena dianggap berusaha menghubungi resistansi, atau ditembak oleh orang-orang resistansi karena dicurigai bekerjasama dengan tentara Indonesia.⁴⁶ Para pengungsi terpaksa memakan daun-daunan dan umbi-umbian beracun yang ditemukan di daerah sempit tempat mereka masih bisa bergerak, dan akibatnya mereka menderita muntah-muntah dan diare. Seorang mantan penghuni kamp Uma Metan (Alas, Manufahi) mengatakan bahwa orang banyak menderita kolera, beri-beri, dan tuberkulosis akibat kekurangan gizi dan buruknya mutu air minum, dan 10 sampai 20 orang meninggal setiap hari.⁴⁷

Orang-orang yang dipindahkan dari desa-desa di mana terjadi pemberontakan atau bentuk-bentuk resistansi lainnya terhadap Indonesia, bisa menghadapi kondisi yang bahkan lebih keras daripada kondisi di kamp-kamp untuk orang-orang yang menyerahkan diri. Bila para tahanan ini tidak terlibat dalam kegiatan resistansi, seperti yang kebanyakan terjadi, perlakuan terhadap mereka mengandung unsur pembalasan dan hukuman kolektif. Demikianlah, setelah pemberontakan pada Agustus-September 1983, seluruh penghuni desa, bukan hanya kerabat para tentara Falintil dan milisi Hansip yang membelot ke gunung tetapi juga tetangga-tetangga mereka, dikepung dan dipindahkan ke desa-desa baru di mana mereka ditempatkan tanpa makanan, tempat tinggal, sanitasi, serta perawatan kesehatan yang memadai. Para tahanan dilarang bertani atau meninggalkan kamp dengan alasan apapun. Mengunjungi kebun khususnya dilarang, karena kebun dipandang sebagai tempat pertemuan penduduk sipil dan gerilyawan.⁴⁸ Misalnya, setelah peristiwa Kraras pada 8 Agustus 1983, orang-orang yang selamat dari gelombang eksekusi setelah peristiwa itu dipindahkan ke Lalerek Mutin, di daerah Luca, Viqueque, yang sebelumnya tidak dihuni karena iklimnya yang sangat panas dan kering serta tanahnya yang tidak subur. Kepala desa menguraikan tentang keadaan di sana:

Ketika kami tiba di tempat kami dipindahkan oleh Nanggala [Kopassus], semua peralatan kami seperti parang, pisau, sekop, cangkul, linggis, dan peralatan pertanian lainnya disita. Rumah-

oleh militer (lihat Bagian 7: Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan). Walaupun beberapa pengungsi mencurigai mereka diracun, kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh “kelebihan protein” akibat memakan makanan berkadar protein tinggi setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun dalam kondisi kekurangan gizi yang parah.

rumah dibangun berderet di sepanjang jalan utama agar mudah diawasi. Rumah-rumah dan fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk kami oleh Nanggala sungguh kumuh dan tak bisa dihuni...Rumah-rumah dibangun secara darurat, bukan untuk digunakan secara permanen. Tidak ada makanan samasekali...Keamanan luarbiasa ketat dan kami dilarang bertani di luar kamp. Kami diharuskan berkumpul setiap pagi dan sore untuk memastikan bahwa semua orang ada. Kalau ingin pergi sejauh 200 meter dari kamp ke sebuah kebun, kami harus lebih dulu meminta surat jalan, jadi pada dasarnya meninggalkan kamp itu mustahil. Kami dilarang berhubungan dengan cara apapun dengan dunia luar; tidak ada komunikasi yang diperbolehkan dengan desa-desa di sekitar kamp. Tidak ada bantuan medis samasekali. Selama tinggal di sana, kami hidup dalam tekanan psikologis dan trauma yang mendalam, dan merasa sangat tertekan.⁴⁹

Setelah empat atau lima bulan, ketika jumlah orang yang meninggal meningkat, tentara yang menjaga memperbolehkan orang-orang di Lalerek Mutin pergi keluar mencari makanan dua kali dalam seminggu dengan syarat mereka juga harus membakar, mencabut atau, kalau tidak, menghancurkan sumber-sumber makanan itu supaya resistansi tidak mendapatkan makanan.⁵⁰

Tempat lain yang dipilih karena letaknya terpencil, bukan karena kapasitasnya untuk mendukung orang-orang yang dikirim ke sana, adalah Atauro, sebuah pulau di lepas pantai Dili yang juga pernah digunakan oleh Portugis untuk pusat penahanan. Pada puncaknya, akhir 1982, penghuni kamp Atauro banyaknya 4.000 orang lebih,⁵¹ dua kali lebih banyak daripada penduduk setempat ketika itu, yang sebelumnya sudah kesulitan mengais penghidupan di pulau yang kering dan tidak subur itu.⁵² Seorang tahanan mengingat saat kedatangannya di kamp Atauro:

Ketika kami tiba di sana, saya dipisahkan dari adik laki-laki saya [Mateus]. Dia tinggal di rumah nomor 22 bersama 60 orang lainnya; Saya berada di nomor 24 bersama 70 orang. [Sumber-sumber lain melaporkan bahwa rumah-rumah itu berukuran 14 x 10 m]. Rumah-rumah tempat kami tinggal di dalamnya tidak ada apa-apa, hanya selembat atap seng dan terpal sebagai dindingnya. Tidak ada tempat tidur...Awalnya militer tidak memberi kami makanan samasekali. Mateus dan saya makan apa yang kami bawa dari Quelicai. Sebulan kemudian, kami mendapat ransum makanan dari militer, tiga kaleng jagung. Ini adalah jatah untuk seluruh keluarga, yang harus bertahan selama dua minggu karena kami hanya mendapat jatah dua kali sebulan...Orang-orang yang tak tahan lapar mencuri pepaya dan singkong milik penduduk setempat...Setiap hari 2-5 orang mati karena lapar, kebanyakan anak-anak dan orang tua.⁵³

Pelanggaran hak atas kesehatan dan pendidikan merupakan masalah berat di kamp-kamp. Kondisi ekstrem di “kamp-kamp pemukiman kembali” yang menjadi tempat pemindahan keluarga-keluarga, dan bahkan seluruh desa, berdampak pada pendidikan yang jauh lebih buruk, melampaui segala kekurangan sistem pendidikan “normal” (lihat Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan). Penelitian Komisi dan sumber-sumber sekunder menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, anak-anak di kamp-kamp tersebut tidak mendapatkan pendidikan samasekali atau hanya mendapatkan pendidikan yang tidak memadai. Di kamp-kamp penahanan di distrik Lautém dan Liquiçá, sekolah samasekali tidak ada sejak invasi sampai 1982-1983.⁵⁴ Di sebuah kamp lainnya, di Uma Metan (Alas, Manufahi), militer membangun “sekolah”, yang sepertinya untuk mengajarkan bahasa Indonesia, tetapi pada kenyataannya menjadi pusat pemerkosaan yang terkenal keji:

Sebuah sekolah darurat dibangun di Uma Metan atas perintah Linud 700, Nanggala [Kopassus], dan Koramil. Bangunan ini dibuat dari bahan-bahan tradisional dan panjangnya 12 meter. Sekolah ini dibangun agar penduduk yang ingin belajar bahasa Indonesia bisa belajar. Prosesnya adalah setiap malam semua perempuan di Uma Metan mandi dan kemudian masuk ke kelas mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, yang tentu saja diajarkan oleh [ABRI] dari wilayah itu. Hal yang tak lazim ialah bahwa sekolah itu juga digunakan oleh Nanggala, Linud 700, dan Koramil untuk melampiaskan nafsu seksual mereka terhadap setiap perempuan yang mereka inginkan...ini diketahui oleh komandan mereka, bahkan komandan itu juga ambil bagian.⁵⁵

Jika ada sekolah, kondisi di kamp-kamp yang sangat parah membuat usaha bertahan hidup menjadi keharusan tertinggi, sehingga pendidikan berada di urutan terbawah dalam daftar prioritas anak-anak, dan bagi anak-anak yang menderita kekurangan gizi serta tekanan emosional yang berat, sekolah menjadi pengalaman yang amat membebani.

Pendidikan anak juga dikorbankan di Ataúro. Penguasa Indonesia mengatakan kepada suatu delegasi yang berkunjung ke sana bahwa ada 17 orang guru: namun delegasi tersebut mengamati bahwa pada saat kunjungan mereka hanya ada sedikit anak di dalam kelas.⁵⁶

Rumah dan tanah

62. Menikmati rumah dan tanah secara damai merupakan unsur yang esensial bagi martabat manusia dan keamanan seseorang, baik dari segi fisik maupun emosional. Dalam masyarakat agraris seperti Timor-Leste, tanah adalah komoditi mendasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dengan demikian, hak untuk mendapatkan rumah dan tanah tidak dapat dipisahkan dari hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, termasuk makanan, kesehatan, dan kemampuan untuk mendapatkan nafkah yang memadai. Tanah juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang dalam,⁵⁷ dan merupakan simbol “keberakaran” dan asal-usul.’

63. Kepemilikan tanah dan konflik-konflik seputar rumah dan tanah adalah persoalan yang rumit. Komisi dibatasi oleh mandatnya untuk tidak mengurus pertikaian-pertikaian yang spesifik.⁵⁸ Karena itu, pembahasan berikut ini dirancang untuk melihat secara umum sifat masalah ini dan asal-usulnya dalam konflik-konflik yang terjadi antara 1974 dan 1999.

64. Konflik disebutkan menjadi faktor pendorong pada 50,7% pemindahan paksa, tapi beragamnya keadaan yang memaksa pemindahan penduduk dari tanah mereka dalam kurun waktu yang menjadi mandat CAVR menunjukkan kerumitan dari masalah ini:

- Di waktu aksi bersenjata UDT dan reaksi bersenjata Fretilin, anggota-anggota dan para pendukung kedua partai politik itu ambil bagian dalam pembakaran rumah, penghancuran harta benda, dan kekerasan yang membuat penduduk sipil melarikan diri dari desa mereka. Dalam hal tertentu, penduduk sipil di distrik-distrik bagian barat melarikan diri atau dipaksa menyeberangi perbatasan internasional memasuki Timor Barat, Indonesia.
- Ada bukti bahwa Fretilin dan pasukan Falintil memindahkan sebagian penduduk sipil ke gunung-gunung. Dari kasus-kasus pemindahan yang dilaporkan kepada Komisi, 12,8% deponen mengatakan bahwa Falintil meminta mereka pindah. Bukti kualitatif menunjukkan bahwa kadang-kadang permintaan tersebut muncul dari rasa prihatin tentang keamanan rakyat sipil, tetapi kadang-kadang motivasinya politik. Ratusan ribu penduduk sipil diungsikan bersama pasukan Falintil, walaupun hanya ada sedikit rencana untuk menjamin bahwa mereka diberi makan atau tempat tinggal. Fretilin juga membakar sejumlah rumah penduduk sipil dan tanaman. Sebelum 1978, rakyat sipil dilarang menyerahkan diri, dan siapapun yang mencoba melakukannya bisa ditahan atau dibunuh. Namun, kebijakan ini diubah, dan ribuan penduduk sipil menyerahkan diri ke militer Indonesia antara 1978 - 1979.

.....
* Ini khususnya berlaku pada situasi konflik dan pasca-konflik, saat tanah dan hubungan (atau tidak adanya hubungan) antara kelompok-kelompok tertentu dengan tanah menjadi retorika utama di balik kekerasan. Lihat, misalnya, Liisa Malkki, *Purity in Exile: Violence, Memory, and National Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania*, University of Chicago, Chicago, 1997.

- Militer Indonesia berkali-kali melakukan pemindahan penduduk sipil. Dalam 30,7% kasus pemindahan paksa ini, para korban mengatakan bahwa tentara Indonesia meminta mereka pindah. Pada 1999, kelompok-kelompok militer juga melakukan pemindahan paksa penduduk, dan disebut dalam 6% kasus.
- Pemindahan keluar Timor-Leste mencakup pemindahan paksa ke kamp-kamp di Timor Barat. Ini terjadi sebelum invasi Indonesia dan setelah Jajak Pendapat 1999.
- Serangan membabitkan terhadap kota-kota oleh pasukan keamanan Indonesia dan kakitangan mereka mendorong penduduk sipil lari dari rumah-rumah mereka menuju gunung-gunung, di mana mereka tidak punya makanan atau tempat tinggal. Pasukan keamanan Indonesia dan kakitangan mereka juga secara sengaja memaksa penduduk sipil untuk keluar dari desa-desa mereka dengan cara membakar rumah dan kebun mereka serta menjarah barang milik mereka.
- Setelah menyerah kepada militer Indonesia, penduduk sipil ditahan oleh militer Indonesia di kamp-kamp penahanan, yang tempat tinggal dan fasilitas sanitasinya begitu tidak memadai sehingga membahayakan.
- Pada awal dasawarsa 1980-an orang-orang yang dicurigai mendukung gerakan kemerdekaan dikirim ke Pulau Ataúro, kebanyakan untuk beberapa tahun.
- Pemindahan paksa dilakukan di dalam negeri maupun ke luar negeri: 54,7% di dalam satu subdistrik; 16,5% di dalam satu distrik; 15,2% di dalam satu kawasan; 9,0% di dalam Timor-Leste; 4,1% ke luar Timor-Leste. Walaupun kebanyakan pemindahan bersifat lokal, pemindahan biasanya berlangsung untuk waktu yang lama—50% pemindahan berlangsung lebih daripada dua tahun.

65. Dampak dari pemindahan-pemindahan ini sangat luas dan beragam, tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap hak untuk memiliki rumah dan tanah, tetapi juga pelanggaran atas hak untuk mendapatkan makanan dan penghidupan. Pemindahan yang berulang kali terhadap penduduk dalam jumlah besar telah mengakibatkan rusaknya jalinan sosial masyarakat Timor-Leste dengan konsekuensi yang kemungkinan besar bersifat jangka panjang. Setiap kejadian pemindahan berdampak negatif pada hak seseorang atas rumah dan tempat tinggal yang memadai.

66. Data militer menunjukkan bahwa pada 6 Desember 1978 (yaitu segera setelah jatuhnya *zonas libertadas* di Gunung Matebian), 318.921 orang, hampir separuh dari seluruh penduduk Timor-Leste sebelum invasi ditempatkan di kamp-kamp.* Setelah Jajak Pendapat, sekitar 250.000 orang dipindahkan paksa ke Timor Barat, dan kebanyakan ke tanah yang sudah ditempati oleh penduduk setempat di Timor

* Alex Dirdja SJ, "Timor Timur: Beberapa Pengamatan dan Pemikiran", Dili, 25 April 1979, halaman 2 (mengutip angka-angka yang diberikan oleh Asisten Teritorial, Departemen Pertahanan dan Keamanan). Deponen-deponen yang memberikan pernyataan kepada Komisi mengenai pemindahan paksa jarang menyebutkan tempat mereka dipindahkan dan akibatnya Komisi tidak bisa memberikan angka sendiri yang sebanding mengenai masalah ini.

Barat. Pemandangan tidak hanya mencabut akar orang-orang yang dipindahkan, tapi juga orang-orang yang tanahnya ditempati oleh pengungsi dalam jumlah banyak. Menurut seorang pengamat:

Di masa pendudukan, orang-orang yang masih tinggal di tanah adat mereka yang ditempati para pengungsi semuanya mengungkapkan kesediaan untuk menerima para pemukim baru itu di antara mereka, karena dalam kondisi krisis tidak ada alternatif lain bagi orang-orang yang mengungsi ini. Selain itu, mempermasalahakan klaim atas tanah dapat menarik perhatian militer yang tidak diinginkan, dan suasana ketakutan meredam segala perasaan tidak puas yang mungkin ada terhadap pemukiman penduduk baru ini. Walaupun ada pemilik tanah adat yang diajak bicara mengenai tempat untuk orang-orang yang dipindahkan, lebih banyak yang melaporkan bahwa para pendatang tersebut ditempatkan di tanah mereka tanpa konsultasi atau ganti rugi terlebih dahulu.⁵⁹

67. Pemandangan-pemandangan ini, yang kadang-kadang berlangsung selama beberapa dasawarsa, berarti bahwa banyak penduduk desa yang merasa bahwa mereka telah berbuat lebih banyak untuk lokasi baru mereka dibandingkan tempat asal mereka, di mana ladang dan kebun mereka jadi terlantar atau ditempati oleh orang lain. Akibatnya, banyak pengungsi lebih memilih untuk tinggal daripada kembali kampung halaman mereka dan berusaha membangun kembali rumah dan kebun mereka.⁶⁰ Fitzpatrick mengutip tiga contoh dari Distrik Manatuto. Satu desa memutuskan untuk bersama-sama kembali ke daerah asal mereka. Desa lain memilih untuk tinggal walaupun desa di sekitar mengklaim hak atas tanah yang mereka tempati. Desa ketiga ingin pindah ke desa transmigrasi yang ditinggalkan oleh para migran Indonesia.⁶¹ Apakah mereka memilih tinggal atau kembali, pemindahan sedemikian banyak orang telah menyebabkan meluasnya konflik atas tanah dan sumberdaya serta ketidakpastian mengenai standar hukum mana yang sebenarnya berlaku.⁶²

68. Ketimbang mengambil langkah untuk memperbolehkan penduduk memiliki hak atas tanah dan menikmati dengan tenteram rumah dan tanah mereka di Timor-Leste, sikap terbaik penguasa Indonesia adalah “tidak menganggap hal ini sebagai prioritas bila dibandingkan dengan keamanan dan pembangunan”, dan yang terburuk adalah mereka justru memperparah masalah ini.⁶³ Karena itu, tanah menjadi salah satu sumber pertikaian utama di Timor-Leste di masa pendudukan dan hingga kini. Selain pemindahan massal yang diuraikan di atas, api pertikaian juga semakin membara dengan tidak diakuinya klaim adat, baik oleh negara maupun kepentingan swasta yang dilindungi oleh negara, serta dengan penetapan batas-batas wilayah adat atau wilayah administrasi yang baru.⁶⁴

69. Selain gagal mengatasi pertikaian tanah, Indonesia juga menyebabkan langkanya tempat tinggal dan tidak adanya jaminan untuk hak milik dengan tindakannya yang sewenang-wenang menyita bidang-bidang tanah adat yang luas. Penyitaan tanah

oleh negara, atau oleh kepentingan swasta yang dilindungi negara, umum terjadi di Indonesia. Negara memandang tanah apapun yang tanpa kepemilikan resmi sebagai tanah milik negara, yang dikelola oleh negara untuk “kepentingan umum”. Tapi, hanya ada sedikit imbalan atau ganti rugi bagi mereka yang tanahnya disita untuk kepentingan penanaman modal komersial yang oleh negara dianggap baik untuk “pembangunan”.

70. Walaupun penggunaan kekuasaan negara yang sewenang-wenang untuk mengambil tanah tidak hanya terjadi di Timor-Leste, tingkat militerisasi serta kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh pasukan keamanan menjadikan proses perampasan tanah di Timor-Leste jauh lebih menakutkan. Sebuah laporan yang disusun oleh lembaga bantuan hukum Timor-Leste, Yayasan HAK, menyebutkan kasus-kasus di mana penduduk lokal diusir dari tanah mereka oleh negara untuk dijadikan kantor pemerintah, perumahan pegawai negeri sipil, pasar, konsesi penebangan hutan, pabrik gula, dan pabrik kayu lapis, yang semuanya dengan ganti rugi dalam jumlah kecil atau tanpa ganti rugi sama-sekali. Jika penduduk memprotes, militer akan mengintimidasi hingga mereka tunduk.⁶⁵ Dalam suatu kasus seperti ini, sebuah rencana perkebunan tebu seluas 200.000 hektar yang melibatkan penanaman modal sebesar USD800 juta oleh perusahaan-perusahaan yang di antaranya konon melibatkan anak laki-laki Presiden Suharto, Tommy Soeharto, akan mencaplok seluruh Desa Lore I (Lospalos, Lautém).⁶⁶ Ke-240 keluarga yang tinggal di desa itu menandatangani surat protes yang dilayangkan kepada bupati setempat, namun diabaikan begitu saja. Yayasan HAK diminta bertindak atas nama penduduk desa tersebut di pengadilan, tapi pasukan keamanan kemudian menutup desa tersebut terhadap pengunjung dari luar.⁶⁷ Kasus ini menggambarkan bagaimana orang-orang kehilangan hak atas tanah di Timor-Leste:

Di bawah pendudukan Indonesia, hampir tidak ada ganti-rugi bagi pemilik tanah, sangat sedikit mekanisme independen untuk menentukan harga tanah, tidak ada hak efektif untuk menggugat ke pengadilan yang independen, ada penganiayaan dan intimidasi terhadap orang-orang yang melapor, tidak ada hukum yang wajar baik dalam penentuan status tanah atau dalam pengajuan keberatan, dan tidak ada definisi yang jelas mengenai pembangunan untuk “kepentingan umum”.⁶⁸

71. Penguasa pendudukan Indonesia beranggapan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang No. 7/1976 yang menetapkan Timor-Leste sebagai bagian dari negara Indonesia, semua hukum nasional berlaku di wilayah ini. Ini termasuk hukum pertanahan dan kehutanan yang menganggap semua tanah yang tidak memiliki sertifikat pemilikan pribadi sebagai tanah negara. Tanah-tanah ini kemudian dialihkan ke Pemerintahan Transisi PBB pada 1999 dan kemudian ke negara merdeka Timor-Leste pada 2002. Fitzpatrick mencatat bahwa di Dili saja, 40% dari seluruh luas tanah digolongkan sebagai ‘tanah kosong negara’ (tanpa penghuni informal yang diakui). Kemungkinannya kecil bahwa selama masa pendudukan tanah ini memang tidak ada yang menempati.

72. Catatan Indonesia dari Distrik Bobonaro, Covalima, Oecussi, Baucau, Manatuto, Aileu, dan Liquiçá menunjukkan bahwa total 189.660 hektar, atau 55% dari seluruh luas tanah di tujuh distrik ini, sebagai 'tanah kosong negara'. Selanjutnya, ada 50.440 hektar, 14,6% dari keseluruhan luas tanah, digolongkan sebagai 'tanah negara yang ditempati'. Ini menyisakan hanya 7,4% dari tanah di tujuh distrik ini sebagai tanah yang tergolong tanah adat.⁶⁹

Dampak ekonomi dari politik pembumihangusan 1999

Membahas dampak ekonomi dari gelombang kekerasan yang dilancarkan oleh TNI dan milisi menyusul Jajak Pendapat 1999 berisiko mengecilkkan skala teror pada masa itu dan kejamnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Timor-Leste. Namun, pembumihangusan yang menyertai penarikan mundur tentara Indonesia memang memiliki dampak ekonomi yang parah dan berjangka panjang.

Misi Penilaian Bersama untuk Timor-Leste 1999 yang diprakarsai oleh Bank Dunia memperkirakan bahwa kehancuran pasca-Jajak Pendapat:

- Menghancurkan hampir seluruh perlengkapan modern dan infrastruktur fisik
- Secara efektif menghilangkan semua struktur administrasi akibat larinya pegawai dan kehancuran lebih daripada 70% gedung dan semua arsip pemerintah
- Menyingkirkan 75% penduduk dari tempat tinggal mereka
- Mengakibatkan inflasi yang hebat, yang mencakup kenaikan harga minyak goreng tujuh kali lipat; garam, lima kali lipat; susu kaleng, enam kali lipat; dan sabun cuci, sepuluh kali lipat
- Memorakporandakan telekomunikasi dengan menghancurkan menara transmisi serta banyak papan sambungan (*switchboard*) dan kabel
- Mengakibatkan 80 - 90% rumah di kota-kota utama dan pedesaan tidak bisa dihuni
- Menyebabkan pengangguran besar-besaran di perkotaan
- Mengakibatkan menurunnya PDB riil sebesar 40 - 50% di tahun 1999 saja

Selain itu, hasil pertanian berkurang sebesar 30 - 40% karena:

- Kurangnya tenaga kerja pertanian karena pemindahan

- Kehilangan alat pengolah lahan akibat pembunuhan ternak dan perusakan serta penjarahan peralatan pertanian
- Tidak tersedianya bibit karena bibit dikonsumsi sebagai makanan akibat ketiadaan pilihan lain.⁷⁰

Kekerasan juga mengakibatkan kerusakan total sistem kesehatan. Rumah sakit dan klinik-klinik hancur, semua obat dan peralatan hilang, serta hampir semua tenaga kesehatan senior, termasuk 130 dari 160 dokter, meninggalkan wilayah ini.⁷¹ Keadaan yang sama terjadi pada sistem pendidikan: 95% sekolah dan lembaga pendidikan lain dihancurkan; gedung, perabot, dan peralatan hilang; dan 70 – 80% dari pegawai administrasi dan tenaga pengajar sekolah menengah lari.⁷²

Mengingat penghancuran yang dilakukan oleh militer Indonesia dan kakitangannya ketika mereka meninggalkan Timor-Leste, pernyataan berikut dalam “Dua Puluh Tahun Pembangunan Timor Timur” yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Indonesia merupakan ironi yang pahit:

*Pembangunan di bekas koloni Portugis ini harus dimulai dari bawah lagi. Tidak ada satu hal pun yang berarti yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial. Pembangunan daerah ini akan dijalankan tahap demi tahap.*⁷³

Hak atas kesehatan

Pengertian ‘hak atas kesehatan’

73. Hak atas kesehatan adalah hakiki bagi menikmati hak-hak asasi manusia yang lain. Hak ini dinyatakan dalam KIHESB bukan sebagai hak untuk sehat, tetapi:

Hak bagi setiap orang untuk dapat menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi mungkin (Pasal 12[1]).

74. Langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah-pemerintah untuk merealisasi ini antara lain:

- ketentuan untuk mengurangi tingkat persalinan mati dan kematian bayi serta untuk perkembangan sehat anak-anak
- perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri
- pencegahan, pengobatan, dan pengendalian penyakit-penyakit epidemis, endemik, terkait pekerjaan, dan penyakit-penyakit lain

- menciptakan kondisi yang akan menjamin pelayanan medis dan perawatan medis ketika seseorang jatuh sakit. (KIHESB, Pasal 12[2])

75. Hak atas kesehatan mencakup kebebasan-kebebasan seperti hak seseorang untuk mengatur kesehatan atau badannya sendiri, termasuk kebebasan seksual dan reproduksi, dan untuk terbebas dari campur tangan seperti penyiksaan dan tindakan medis yang tanpa persetujuan.⁷⁴

76. Hal ini juga melibatkan hak-hak seperti hak atas informasi serta pendidikan mengenai kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. Bagi kaum perempuan, ini berarti informasi yang cukup mengenai pelayanan reproduksi harus diberikan.⁷⁵ Pemenuhan standar minimum hak-hak yang disebut di atas, seperti akses pada makanan pokok, perumahan, dan sanitasi juga merupakan kewajiban utama dari negara-negara dalam memenuhi hak untuk kesehatan.⁷⁶

77. Komisi yakin bahwa Indonesia telah melanggar hak untuk kesehatan dalam beberapa cara. Alasan utama kegagalan negara Indonesia untuk menghormati dan memenuhi hak untuk kesehatan adalah prioritas yang diberikan kepada keamanan tanpa memperhatikan dampak dari kebijakan keamanannya terhadap kesehatan umum. Banyak langkah-langkah keamanan yang dengan jelas berdampak buruk pada kesehatan umum, seperti:

- Penggunaan ‘kamp pemukiman kembali’ untuk mengisolasi gerakan resistansi dan menghukum kerabat serta pendukung mereka
- Penggunaan penyiksaan secara luas untuk mengumpulkan informasi dan mengintimidasi⁷
- Perekrutan paksa anak-anak sebagai ‘tenaga bantuan operasi’ (TBO) yang membahayakan kesehatan mereka dengan membawa mereka pada pertempuran dan kerja paksa yang sangat berat serta dengan mengabaikan kebutuhan gizi dan medis mereka

78. Seluruh dana yang diinvestasikan Indonesia untuk kesehatan di Timor-Leste memang besar baik dalam pengertian absolut atau jika dibandingkan dengan pengeluaran penguasa Portugis, namun sebagian besar investasi pemerintah Indonesia di Timor-Leste diarahkan pada pengeluaran yang bertujuan memperkuat kontrol militer. Indonesia juga gagal mengambil langkah untuk meningkatkan pemenuhan bertahap hak penduduk untuk mencapai standar kesehatan yang setinggi mungkin. Seperti yang ditunjukkan Tabel 8 pada paragraf 82, investasi Indonesia di sektor kesehatan di Timor-Leste tidak efektif dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang kronis dan kematian bayi. Satu sebabnya adalah kegagalan untuk mengatasi kemiskinan sebagai penyebab dasar penyakit dan buruknya kesehatan. Sebab lainnya adalah pelayanan kesehatan dengan pendekatan dari atas ke bawah dan bersifat paternalistik. Pendekatan seperti ini tidak memberi informasi yang cukup kepada pasien tentang perawatan kesehatan yang diberikan dan hanya memberikan sedikit kesempatan untuk memilih.

.....
* Perlu dicatat bahwa UDT, dan terutama Fretilin, juga menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan informasi atau mengintimidasi orang sipil. Lihat Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan, dan Penganiayaan.

79. Di Indonesia sendiri, masyarakat juga diperlakukan dengan paternalisme yang sama. Bedanya adalah di Timor-Leste tingkat militerisasi luarbiasa tinggi dan ketakutan serta ketidakpercayaan sebagai akibatnya juga sangat tinggi. Dampak buruk dari faktor-faktor struktural seperti ini sangat terlihat di bidang hak reproduksi, di mana perempuan, baik dewasa maupun muda, dihadapkan pada risiko kesehatan oleh berlebihannya pengejaran target yang mengakibatkan diabaikannya kebutuhan kesehatan mereka sebagai pribadi.

Kesehatan masyarakat di masa kekuasaan Portugis

80. Bahkan tanpa adanya konflik bersenjata sekalipun, kemiskinan yang meluas disertai dengan pemerintahan yang non-partisipatoris dan tidak bertanggung jawab kepada rakyat berarti bahwa rakyat Timor-Leste, baik di bawah pendudukan Portugal maupun Indonesia, tidak menikmati “realisasi progresif...terhadap sumberdaya [negara] maksimum yang tersedia” bagi hak mereka atas kesehatan.⁷⁷ Walaupun hanya ada sedikit data tentang kesehatan masyarakat dari masa Portugis, sangat kecilnya investasi pemerintah kolonial untuk pelayanan umum, iklim yang keras, dan malaria yang endemik mengindikasikan bahwa keadaan kesehatan penduduk pada umumnya sangat buruk. Ketika itu ada satu rumah sakit berperalatan lengkap di Dili,^{*} fasilitas kesehatan yang sangat sederhana di setiap distrik dengan empat orang perawat dan satu orang dokter, dan setiap subdistrik (*posto*) memiliki satu pos kesehatan dengan seorang perawat (untuk sekitar 10.000 penduduk). Seorang pakar kebijakan kesehatan mengatakan kepada Komisi bahwa perkiraannya mengenai jumlah total pegawai kesehatan di akhir masa kekuasaan Portugis—sekitar 14 dokter dan 88 – 120 perawat—adalah “terlalu tinggi”. Ia menambahkan bahwa staf yang sedikit ini tidak memiliki keterampilan yang baik dan sering tidak ada di tempat kerja mereka.⁷⁸ Pelayanan kesehatan terpusat di kota-kota utama dan hampir tidak ada di desa-desa.[†] Seorang pengamat melaporkan bahwa “banyak wilayah yang tidak memiliki pelayanan kesehatan apapun, termasuk obat-obatan”.⁷⁹ Dengan demikian, sistem pelayanan kesehatan Portugis pada umumnya ditujukan bagi kebutuhan orang asing dan elite lokal yang tinggal di kota, dan bukannya untuk penduduk pada umumnya yang tinggal di perdesaan, yang kesehatannya menghadapi risiko terbesar.

* Palang Merah Australia menganggap bahwa rumah sakit tersebut memiliki cukup peralatan dan tidak memerlukan peralatan atau antibiotik tambahan. “Report of Activities of International Committee of the Red Cross Medical Team in East Timor from Aug 30 - Sept 4, 1975” (Laporan Kegiatan Tim Medis Palang Merah Internasional di Timor-Leste, dari 30 Agustus - 4 September 1975), halaman 2.

† Komentar ini diperkuat oleh John Whitehall, dari Australian Society for Intercountry Aid - Timor (ASI-AT), yang mengatakan bahwa tifus bersifat endemik, malaria menular, dan TBC “samasekali tidak diketahui.” [Mayor Jenderal C.M. Gurner, penasihat kesehatan Gabungan Angkatan, 25 November 1975. John Whitehall, presentasi pada Consultation on East Timor (Konsultasi tentang Timor-Leste), Melbourne, 26 September 1975.]

Pendudukan Indonesia

81. Karena itu, ketika menginvasi pada 1975, Indonesia mendapati penduduk yang kondisi kesehatannya sudah buruk. Indonesia kemudian mengalokasikan sekitar 5% dari dana pembangunannya untuk Timor-Leste untuk investasi di bidang kesehatan. Walaupun Indonesia mengeluarkan investasi besar, di akhir masa pendudukannya sebagian besar indikator kesehatan masyarakat tetap buruk, bahkan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi Indonesia yang lain. Usia harapan hidup hanyalah 55 pada 1999,⁸⁰ lebih rendah daripada provinsi Indonesia manapun dan lebih rendah dibandingkan negara Asia dan Pasifik manapun kecuali Laos.⁸¹

Tingkat kematian ibu dan anak serta perkembangan anak

82. Selama masa pendudukan Indonesia, tingkat kematian ibu dan anak menurun namun tidak sampai pada tingkat yang seharusnya dapat dicapai. Dari angka yang sangat tinggi, tingkat kematian ibu 14% dan kematian anak 24% pada 1980, angka ini menurun masing-masing menjadi 13,5% dan 15,7% pada 1996.⁸² Walau begitu, angka 1996 masih tetap tinggi menurut standar apapun, lebih tinggi, misalnya, daripada provinsi manapun di Indonesia. Tingkat kematian bayi masih tetap tiga kali lebih tinggi daripada angka rata-rata Indonesia (lihat Tabel 8 di bawah ini).

| | Kematian Bayi (tiap 1.000 kelahiran hidup) | Buta Huruf (%) | Usia Harapan Hidup |
|---------------------------|--|----------------|--------------------|
| Timor-Leste (Timor Timur) | 135 | 60 | 54 |
| Nusa Tenggara Timur | 51 | 21 | 64 |
| Nusa Tenggara Barat | 75 | 32 | 59 |
| Maluku | 47 | 7 | 65 |
| Papua (Irian Jaya) | 51 | 33 | 65 |
| Indonesia (rata-rata) | 44 | 15 | 66 |

Sumber: BPS 1999, UNDP 1997, 2001; www.undp.org/Depts/unsd/social/health.htm

83. Seperti halnya tingkat kematian anak dan bayi, tingkat kematian ibu juga tetap tinggi selama masa pendudukan Indonesia. Bahkan pada 1990-1994, masa yang disebut sebagai 'tahap pembangunan jangka panjang', tingkat kematian ibu di Timor-Leste masih 8,3%, kelima tertinggi dari negara manapun di dunia.' Ini sebagian disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi di kalangan ibu-ibu Timor-Leste yang umumnya beragama Katolik. Pada umumnya perempuan di Timor-Leste melahirkan 7,4 kali seumur hidupnya. Bahkan ketika risiko yang terkait dengan persalinan semakin

* Hanya Guinea Bissau, Eritrea, Republik Afrika Tengah, dan Mozambik yang lebih tinggi. UNICEF, *State of the World's Children*, UNICEF, New York, 1998, dikutip dalam Pedersen dan Arneberg, halaman 64.

meningkat pada setiap persalinan berikutnya, menurut data Bank Dunia, pada 1999, 75% persalinan terjadi tanpa dibantu tenaga profesional kesehatan. Ini semakin membahayakan ibu yang sedang bersalin⁸³ dan juga berarti bahwa angka kematian saat bersalin yang dilaporkan mungkin lebih rendah daripada angka yang sebenarnya.⁸⁴ Besarnya jumlah persalinan yang tidak dibantu tenaga kesehatan mungkin disebabkan oleh ketidakpercayaan kaum perempuan kepada petugas kesehatan Indonesia karena program KB yang sangat termiliterisasi (lihat paragraf 92 – 108, di bawah).

84. Kondisi kesehatan yang buruk selama konflik politik tidak hanya mengancam nyawa anak-anak tetapi juga menghambat perkembangan anak-anak yang hidup. Kekurangan gizi yang kronis dan kekurangan mikronutrisi memiliki dampak buruk jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan mental.⁸⁵ Hal-hal ini hampir dapat dipastikan merupakan salah satu sebab bagi korelasi erat antara pendidikan yang rendah dan kemiskinan di Timor-Leste (lihat Tabel 10, paragraf 120).⁸⁶ Dengan perkembangan yang terhambat, anak-anak yang hidup miskin rentan mengalami masalah dalam pendidikan dan pekerjaan kelak dalam hidupnya. Kendala-kendala ini menyulitkan anak-anak untuk mematahkan persoalan kemiskinan setelah mereka dewasa. Komisi percaya bahwa masalah kemiskinan, penyakit, dan kurangnya pendidikan terkait erat dengan lingkaran ini, yang terus berputar di bawah pendudukan Indonesia.

Pengurangan wabah penyakit

85. Penyakit menular yang dapat dicegah tetap menjadi penyebab utama kematian di Timor-Leste.⁸⁷ Berbagai sumber melaporkan antara 1993 dan 1997 bahwa malaria, tuberkulosis, pneumonia, dan gastroenteritis adalah penyakit yang endemik, dan merupakan penyebab utama kematian di Timor-Leste.* Sumber-sumber yang sama melaporkan bahwa orang-orang yang sakit malaria merupakan sepertiga dari jumlah keseluruhan orang yang berobat pada masa yang sama.⁸⁸ Kolera juga umum dilaporkan dalam pernyataan dan kesaksian yang diberikan kepada Komisi, khususnya dalam periode kelaparan dan pemindahan paksa akhir dasawarsa 1970-an, tetapi juga dalam dasawarsa 1980-an. East Timorese Relief Association melaporkan bahwa pada 1988 wabah kolera merupakan penyebab kematian ratusan anak.[†] Tingginya penyebaran penyakit menular merupakan indikator kemiskinan Timor-Leste; penyakit-penyakit ini menunggu kesempatan saja dan mengintai penduduk miskin yang hidup dalam lingkungan yang padat dan tanpa sanitasi atau makanan yang cukup. Menurut Pederson dan Arneberg luasnya persebaran TBC adalah pertanda masalah yang lebih mendalam: “Kenyataan bahwa TBC adalah pembunuh utama di Timor-Leste mencerminkan sistem kesehatan yang gagal menyediakan tingkat kesehatan yang paling dasar bagi penduduk.”⁸⁹

* Pederson dan Arneberg, halaman 70-72. Laporan Sektor Kesehatan Timor-Leste tahun 2000 dari World Health Organization juga memperkirakan bahwa penyakit menular menyebabkan 60% kematian.

† Dilaporkan bahwa ini sebagian karena rumah sakit dan klinik memberi anak-anak di bawah dua tahun dosis obat yang tinggi untuk menyembuhkan kolera. Ines Almeida, “Peran Wanita Dalam Perjuangan,” dalam ETRA, *It's Time to Lead the Way: Timorese People Speak about Resistance, Exile and Identity – Writings from a Conference on East Timor and Its People*, East Timor Relief Association, Collingwood, 1996.

86. Di sisi lain, cakupan program imunisasi meluas dengan mengesankan selama masa pendudukan Indonesia. Sumber-sumber WHO Indonesia, mengutip data pemerintah, melaporkan bahwa pada 1997, 99,6% dari bayi yang dilahirkan tahun itu mendapatkan vaksinasi DPT pertamanya, 100% mendapatkan vaksinasi BCG, 92% mendapatkan imunisasi campak, dan 94% mendapatkan vaksinasi polio yang keempat. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) melaporkan angka yang lebih kecil tapi bukan berarti tidak konsisten: hanya 49% anak usia di bawah lima tahun pada 1995 dan 1996 mendapatkan imunisasi yang lengkap, sedangkan pada 1998, imunisasi lengkap untuk kelompok ini mencapai 59%. Jika angka-angka yang berbeda ini saling mendukung ini menunjukkan peningkatan dramatis vaksinasi. Apapun kasusnya, tingkat persebaran campak, tetanus, difteri, batuk rejan, dan polio yang rendah menunjukkan keberhasilan program imunisasi.

Akses pada pelayanan kesehatan

87. Antara 1975 dan 1999, jumlah dokter umum yang bekerja di wilayah ini meningkat dari 14 menjadi 160 (25 orang di antaranya adalah orang Timor-Leste). Dalam masa yang sama, jumlah perawat meningkat dari 88 –120 menjadi sekitar 1.000 orang. Di penghujung pendudukan Indonesia, terdapat delapan rumah sakit kabupaten, 67 pusat kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan, dan 309 pos pelayanan terpadu.⁹⁰

88. Walaupun kehadiran fisik sistem kesehatan meningkat, akses pada perawatan kesehatan masih tetap sangat terbatas. Selama lebih daripada 20 tahun pendudukan (angka anggaran yang lengkap hanya tersedia sampai tahun anggaran 1993/94) diperkirakan USD13,5 juta dialokasikan ke sektor ini.⁹¹ Fasilitas kesehatan di masa pendudukan Indonesia tetap jauh letaknya, peralatannya tidak lengkap, dan petugas kesehatannya sedikit. Laporan penilaian mengenai kemiskinan negara Bank Dunia yang dikeluarkan Mei 2003 menunjukkan bahwa sebagian besar orang Timor-Leste tinggal dalam jarak lebih daripada satu jam dari fasilitas kesehatan dasar terdekat dan perjalanan ke tempat-tempat ini membutuhkan biaya rata-rata Rp6.700,⁹¹ yaitu seharga sekitar satu kilogram beras.⁹² Fasilitas kesehatan rata-rata dibuka hanya delapan hari dalam sebulan dan dijalankan oleh petugas kesehatan hanya selama empat hari.⁹³ Selain itu, petugas medis pada umumnya tidak terlatih dengan baik dan tidak berpengalaman, dan kebanyakan adalah lulusan baru yang dikirim pemerintah Indonesia untuk tugas wajib di daerah.⁹⁴

89. Sumber-sumber lain menyebut perbedaan budaya antara petugas medis yang kebanyakan orang Indonesia dengan pasiennya yang orang Timor-Leste sebagai penghambat bagi pemberian pelayanan kesehatan yang efektif (menurut statistik pemerintah Indonesia, pada 1999, hanya 26 dari 141 dokter adalah orang Timor-Leste),⁹⁵ serta menyebutkan pula cara pemberian pelayanan yang meremehkan

* Perhitungan ini diambil dari dana pembangunan 'Proyek Sektorial' yang dialokasikan dari tahun anggaran 1976/77 sampai 1993/94. Angka alokasi dan perincian sektorial diambil dari Saldanha, 1994, halaman 160-162, dengan asumsi bahwa sektor kesehatan secara konsisten mencakup 5% dari anggaran, seperti pada tahun anggaran 1993/94.

pasien, yang tidak memberikan informasi yang cukup bagi pasien untuk dapat membuat pilihan dengan baik.⁹⁶ Obat-obatan tidak banyak tersedia dan sering harganya sangat mahal.^{*} Jelas bahwa kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, tidak banyak yang dapat menarik pasien untuk melakukan perjalanan yang jauh dan mahal ke pos-pos kesehatan. Ini berakibat pada kurangnya perawatan pencegahan, dan pasien-pasien yang akhirnya datang ke fasilitas pelayanan medis yang tidak memadai sudah dalam keadaan sakit parah.

90. Kondisi kesehatan yang buruk dan terus berlanjut ini menimbulkan pertanyaan mengapa investasi yang sedemikian besar masih tetap tidak efektif dalam memperbaiki kesehatan masyarakat. Satu sebab tidak efektifnya sistem kesehatan ini adalah bahwa investasi berupa fasilitas kesehatan fisik, yaitu segala gedung dan peralatan, tidak menangani berbagai penyebab penyakit itu sendiri, yaitu: kemiskinan yang telah lama berlangsung, yang pada gilirannya diperkuat oleh kesehatan dan pendidikan yang buruk.

91. Prioritas yang diberikan kepada keamanan juga memainkan peran penting. Ada perbedaan tajam tingkat kematian bayi dan anak antara satu distrik dengan distrik lain, dengan yang tertinggi terjadi di Baucau, Manufahi, Ainaro, dan Covalima.[†] Satu laporan menyebutkan bahwa tingginya angka kematian anak di Distrik Baucau pada periode 1990-1994 mungkin berhubungan dengan konsentrasi 'desa binaan' yang relatif tinggi di distrik tersebut.⁹⁷ Pengamatan ini, walaupun kesimpulannya tidak dapat ditarik tanpa penyelidikan yang lebih mendalam, cukup penting dalam hal ia memperlihatkan dugaan kuat Komisi mengenai korelasi antara tingkat resistansi terhadap pendudukan dengan peningkatan kemiskinan dan angka kematian. 'Desa binaan' digunakan untuk mengontrol penduduk. Kebanyakan desa ini adalah desa baru yang dibangun di tempat-tempat yang sebelumnya dihindari karena lahannya tidak subur atau tingginya tingkat kejangkitan malaria. Tingkat kematian anak yang tinggi di Baucau menggambarkan sekali lagi dampak sosial dan ekonomi dari kekhawatiran berlebihan mengenai keamanan. Selain itu, di wilayah-wilayah dengan konflik politik terparah dan pembunuhan, penghilangan, dan penahanan paling sering terjadi,[‡] ketidakhadiran kepala keluarga yang diakibatkannya mungkin menimbulkan serangkaian dampak sosial dan ekonomi, termasuk menurunnya kemampuan keluarga untuk memberi nafkah bagi anak-anak mereka.

* Obat-obatan kiriman bantuan kadang-kadang dialihkan kepada militer dan kemudian dijual di toko-toko setempat di Dili. Pat Walsh, "East Timor in Transition: Briefing Paper," makalah tidak diterbitkan yang disampaikan atas nama ACFOA pada konferensi Strategic Development Planning for East Timor (Perencanaan Pembangunan Strategis untuk Timor-Leste), Melbourne, 5-9 April 1999.

† Tapi harus dicatat bahwa tingkat angka kematian distrik itu mungkin memiliki kesalahan pada penarikan sampel – khususnya untuk Survei Sampel 1985 dan 1988 yang menjadi dasar dari analisis FAFO.

‡ Salah satu cara mengukur kekuatan resistansi adalah dengan menghitung jumlah pembunuhan orang sipil dan penahanan sewenang-wenang dalam satu distrik dibandingkan dengan distrik-distrik yang lain. Penelitian statistik Komisi menemukan bahwa 64,3% (788/1224) dari pembunuhan orang sipil yang dilaporkan antara 1979 dan 1984 terjadi di distrik-distrik bagian timur, yang mencakup Baucau. Penahanan yang dilaporkan antara 1977 dan 1984 terkonsentrasi di distrik-distrik bagian timur dan tengah (yang mencakup Ainaro dan Manufahi) – dengan 43,0% (4220/9815) dari penahanan yang dilaporkan antara 1979 dan 1984 terjadi di distrik-distrik bagian timur dan 47,8% (4695/9815) di distrik-distrik bagian tengah.

Dampak ekonomi dan sosial pengungsian ke Timor Barat 1999

Sekitar 250.000 orang Timor-Leste yang dipindah paksa ke Timor Barat, Indonesia, setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat September 1999, menghadapi kondisi yang amat berat di kamp-kamp mereka. Mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup, dan makanan yang diberikan dikontrol oleh militer dan milisi, yang menyalurkannya dengan semaunya dan mendiskriminasikan keluarga-keluarga yang diragukan kesetiiaannya pada integrasi.

Satu organisasi nonpemerintah setempat yang memantau kamp-kamp menggambarkan bagaimana kekerasan dan ancaman kekerasan memengaruhi kehidupan sehari-hari para pengungsi:

Beberapa kasus...memperkuat [dugaan] bahwa laki-laki yang bersenjata [atau mempunyai akses kepada senjata] adalah orang yang sebenarnya memiliki kontrol di dalam kamp. Mereka yang sering kali menempati posisi penting, misalnya sebagai pembagi makanan, ketua kamp, atau penjaga pos keamanan...Tidak diragukan lagi bahwa keberadaan senjata atau ancaman senjata turut memengaruhi iklim kekerasan di kamp-kamp tersebut.

Ini memperkuat sinyalemen bahwa mereka yang bersenjata dan mengontrol kamp juga berada dalam posisi untuk mengontrol bantuan yang masuk kamp. Pada umumnya bantuan pangan dibagi menurut sistem jatah, tetapi tidak ada cara untuk menjaga pendistribusian beras sampai ke dalam tangan pengungsi masing-masing...Ketika penimbunan beras dalam jumlah besar terlihat, sebagaimana pernah dicatat oleh salah satu anggota tim, ada kemungkinan "kelebihan" beras tersebut menguntungkan pengungsi yang bersenjata.⁹⁸

Kondisi di kamp-kamp pengungsian terutama berat bagi anak-anak. UNICEF memperkirakan bahwa 25% pengungsi anak-anak di kamp menderita kekurangan gizi.⁹

Anak-anak yang dipaksa mengungsi ke Timor Barat membanjiri sekolah-sekolah setempat, yang tidak siap memenuhi kebutuhan puluhan ribu siswa baru. Trauma pemindahan, kekurangan gizi, dan penyakit yang merajalela di kamp-kamp, serta beban tambahan untuk mencari makan menyebabkan pengungsi anak sekolah tertinggal dibandingkan dengan teman-teman mereka anak-anak Timor Barat.⁹⁹

* Siaran pers UNICEF menyatakan bahwa kekurangan gizi di atas 15% dapat dianggap sebagai 'keadaan darurat gizi yang berat'. UNICEF, siaran pers, CF/DOC/PR/2000/03UNICEF, 18 Januari 2000, tersedia pada <www.unicef.org/newsline/oopr03htm> per 3 Maret 2005.

Pengendalian kelahiran secara paksa

92. Di 1980, tidak lama setelah Indonesia menguasai seluruh wilayah, salah satu kebijakan pembangunan dan program kesehatan pertama yang dicanangkan adalah program pengendalian kelahiran di seluruh wilayah ini.^{*} Sejak awal, program ini sarat dengan berbagai pelanggaran hak reproduksi perempuan. Kenyataan bahwa 80-90% penduduk Timor-Leste beragama Katolik berarti bahwa program ini secara budaya tidak bisa diterima oleh sebagian besar orang.[†] Ketimbang berusaha mendapatkan persetujuan dari para peserta, para administrator program ini justru menjalankannya sebagai sesuatu yang wajib dan tidak berusaha memberi informasi mengenai manfaat dan risikonya. Dalam semangat mereka untuk mencapai target 'akseptor', para petugas program menekan kuat para perempuan untuk menerima pengendalian kelahiran, dengan tidak mengindahkan akibat sampingan atau risiko-risiko kesehatannya. Sifat paksaan dari program ini diperkuat oleh peran penting yang dimainkan militer dalam pelaksanaannya.

93. Sementara aspek-aspek dari program ini juga ditemukan di seluruh Indonesia, dimensi pemaksaan terlihat lebih kuat daripada biasanya di Timor-Leste. Ini karena militerisasi Indonesia mencapai wujudnya yang paling tinggi di Timor-Leste, dengan pemantauan dan pengawasan pada tingkat yang ekstrem, dalam suasana ketakutan dan intimidasi. Konsep 'dwifungsi', yang memberi ABRI/TNI peran pertahanan dan peran sipil, menyediakan legitimasi pada peran utamanya dalam program ini, yang disebut 'ABRI Manunggal KB'.[‡] Lagi-lagi 'ABRI Manunggal KB' tidak hanya ada di Timor-Leste, tapi yang membedakan operasinya di wilayah ini adalah keadaan keterlibatan militer dan dampak traumatis dari kehadirannya. Perilaku militer sejak invasi, termasuk perlakuan mereka terhadap perempuan, harus selalu diingat ketika kita berusaha memahami dampak dari keterlibatan ABRI dalam mempromosikan KB di Timor-Leste.

94. Komisi telah mencatat bagaimana militer Indonesia terlibat dalam memaksimalkan angka 'akseptor', yang menjadi indikator utama keberhasilan program ini. Lagi-lagi, program nasional juga bersifat mengejar target. Sebuah laporan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada 1995 mencatat bahwa "kompetisi antardaerah yang didasarkan atas jumlah 'akseptor' memberi prestise dan dapat membantu promosi jabatan pegawai, dan daerah-daerah dinilai dari delapan aspek keberhasilan, yang salah satunya adalah pencapaian kuantitatif keluarga berencana."[§] Dalam kasus-kasus yang didokumentasi Komisi,

* Program perencanaan keluarga di Indonesia dikenal sebagai KB (Keluarga Berencana) dan dikelola dari pusat oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

† *Timor Timur dalam Angka*, 1981. Tidak jelas apakah angka-angka pemerintah mengenai agama juga mencakup agama anggota militer.

‡ Ini merupakan variasi dari 'ABRI Manunggal Rakyat', yang merupakan nama untuk keterlibatan militer dalam proyek-proyek pembangunan desa.

§ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Laporan Pemerintah 2, Oktober 1995. Salah seorang pengamat independen juga berkomentar: "Keluarga Berencana dimasukkan dalam daftar sektor kebijakan terpilih, yang ditetapkan tahun 1982, untuk evaluasi prestasi gubernur. Para gubernur dinilai dari

perempuan-perempuan berbicara mengenai berganti-gantinya metode kontrasepsi yang diberikan kepada mereka.¹⁰⁰ Menurut sebuah dokumen Bank Dunia, Laporan 7760, 'akseptor kontrasepsi' didefinisikan sebagai "angka perempuan (atau suaminya) yang menjadi pemakai metode kontrasepsi yang belum mereka pakai dalam bulan-bulan menjelang pemakaian, untuk jangka waktu tertentu."¹⁰¹ Selain karena alasan medis, sangat mungkin bahwa para perempuan diganti dari satu metode ke metode yang lain karena setiap kali ini dilakukan mereka akan dicatat sebagai akseptor yang baru.

95. John Fernandes adalah seorang pegawai BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) di Kabupaten Manufahi mulai 1983 sampai 1999. Kritiknya mengenai program KB sama dengan yang dikemukakan banyak orang yang terpajan langsung terhadap program ini sebagaimana ia dijalankan di Timor-Leste dan Indonesia:

Pemerintah Indonesia lebih mengejar angka daripada melihat pada kondisi badan seseorang—apakah orang tersebut kurus [dan sebaiknya tidak ikut KB] atau ia gemuk [dan pantas untuk mengikuti KB]. Yang penting adalah mengejar target.

Saya berani mengatakan bahwa program KB dapat dikatakan paksa karena sudah diatur dari atas. KB merupakan program nasional... yang merupakan landasan/kekuatan hukum dari pemerintah, mulai dari provinsi sampai ke tingkat kabupaten. Mau tak mau masyarakat di Timor Timur harus mengikuti program sama seperti yang berada di provinsi lain.

...sangat jelas bahwa ABRI terlibat dalam promosi KB berdasarkan landasan surat keputusan Pangdam Udayana. Aparat Babinsa dan Bimpolda adalah Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa [PPKBD] yang menerima honor sebanyak Rp3.000 per hari dari BKKBN. Pada saat promosi KB ke desa-desa, mereka berpakaian seragam lengkap sesuai dengan identitas mereka [TNI AD, Polri, dan sebagainya].

Masyarakat, khususnya istri pegawai negeri sipil dan masyarakat yang tinggal di daerah transmigrasi, diwajibkan mengikuti program KB... Jumlah anak dalam keluarga pegawai negeri sipil tidak boleh lebih dari tiga orang karena jumlah itu yang sudah ditentukan di dalam daftar gaji. Kalau lebih dari tiga anak, maka anak itu akan disebut 'anak Hansip' atau 'anak swasta'...

Pemerintah dan ABRI juga memaksa masyarakat kecil yang tinggal di daerah terpencil untuk mengikuti program KB dengan alasan harus meningkatkan mutu pendidikan [anak-anak mereka] dan mengurangi

sembilan jenis target keluarga berencana, termasuk angka kelahiran kotor, jumlah pemakai aktif metode Keluarga Berencana, dan jumlah kelompok KB desa yang diciptakan." Jeremy Shiffman, "Political Management in the Indonesian Family Planning Program", *International Family Planning Perspectives*, Vol. 30 (1), Maret 2004.

angka kematian ibu dan anak. Tetapi dalam kenyataannya, setelah masyarakat mengikuti KB, angka kematian ibu dan anak semakin tinggi dibandingkan dengan angka sebelumnya. [Ada kasus-kasus perempuan yang] setelah mengikuti KB ternyata pada waktu hamil timbul gejala-gejala seperti kepala pusing, hamil di luar kandungan/hamil anggur, banyak keputihan, kurang nafsu makan, kurus, bengkak pada tubuh, dan rematik. Ada juga kasus-kasus di mana pada saat mau melahirkan, air ketuban mengalir di luar dugaan. Bayi-bayi mereka menjadi korban dampaknya juga.¹⁰²

96. John Fernandes mengatakan bahwa BKKBN mempromosikan dan menjalankan pengendalian kelahiran dengan bekerja sama dengan ABRI melalui program KB Manunggal/KB Kes ABRI.* Program tingkat kabupaten ini dicanangkan oleh komandan dan biasanya dilaksanakan melalui Komando Distrik Militer (Kodim). Perempuan yang menjadi anggota Persit (Persatuan Istri Tentara), adalah bagian tak terpisahkan dari program ini, dengan mengunjungi desa-desa mengenakan seragam Persit untuk merekrut para peserta baru. Mereka sendiri juga ikut dalam program:

Bukan hanya perempuan yang tidak ada hubungan dengan militer yang dipaksa ikut dalam program. Militer juga menaikkan angka akseptor dengan membuat perempuan di dalam struktur militer ikut serta. Walaupun anggota Persit, tidak berarti bahwa dia boleh tidak ikut dalam program. Sebaliknya, dia akan menjadi sasaran terdepan, yang ditekan baik langsung atau tidak langsung agar berpartisipasi.¹⁰³

97. Natalia dos Santos adalah istri anggota Batalion Infanteri (Yonif) 744, Saturnino Maubuti, yang pada 1979 disuruh ikut program KB. Natalia cukup berani berbantahan dengan dokter militer dari Jawa bahwa sebagai perempuan yang belum punya anak, ia tidak wajib ikut program ini. Namun ketika dokter tersebut mengatakan bahwa ini adalah peraturan, ia menyadari bahwa jika terus menentang maka ini dapat membahayakan karier suaminya. Selama 20 tahun ia diberi berbagai jenis kontrasepsi, yang semuanya memiliki akibat sampingan yang tidak nyaman. Sekali-kali ia diam-diam berhenti menggunakan kontrasepsi karena ingin hamil atau untuk menghentikan akibat buruk yang dialaminya. Ia sempat hamil dua kali. Kehamilan yang pertama keguguran; yang kedua ia terpaksa aborsi setelah dokter mendiagnosa bahwa ia mengalami "rahim tipis". Ia baru merasa bebas untuk meninggalkan KB setelah diungsikan ke Atambua, Timor Barat, setelah

.....
* Kemungkinan besar yang dijelaskan John Fernandes adalah Program Safari Manunggal KB Kesehatan. Menurut definisi resmi BKKBN: "istilah 'safari' berarti kerjasama antara berbagai kantor tingkat desa dalam mendorong akseptor baru...Prakteknya, 'safari' adalah distribusi massal atau pemasangan massal alat-alat kontrasepsi, yang secara langsung melibatkan pejabat-pejabat lain dan dilakukan pada hari-hari khusus seperti Hari ABRI, Hari Ibu, atau Hari Kemerdekaan." Lihat, misalnya, Nirwan Dewanto, "Coercion in Family Planning still exists in the Family Planning Movement," makalah disampaikan pada Konferensi INGI ke-8 tentang Masyarakat dalam Liberalisasi Ekonomi, Odawara, Japan, 21-23 Maret 1992; Sita Aripurnami, *Hak Reproduksi antara Kontrol dan Perlawanan: Wacana tentang Kebijakan Kependudukan Indonesia*, Kalyanamitra, Jakarta, 1999, halaman 36.

Jajak Pendapat 1999, ketika program ini tidak lagi dijalankan dengan ketat. Dalam wawancaranya dengan Komisi, ia menyampaikan pengalamannya:

Pada saat saya disuruh ganti-ganti menggunakan beberapa jenis KB oleh dokter, saya sangat tertekan, sebab saya dianggap sebagai hewan percobaan untuk menyukseskan KB. Namun saya tidak dapat berbuat banyak karena mengingat status suami saya; sehingga saya hanya rela untuk diperlakukan sesuai dengan kehendak mereka. Saya sangat kecewa karena sampai sekarang saya belum punya anak. Dampak dari beberapa jenis KB yang saya jalani adalah saya mengalami gatal di bagian vagina...dan badan saya semakin hari semakin kurus.¹⁰⁴

98. Ketakutan Natalia bahwa jika ia menolak ikut program ini dapat membawa akibat yang serius cukup beralasan. Kaum perempuan didorong untuk bergabung melalui sebuah sistem imbalan dan hukuman. John Fernandes menjelaskan bagaimana jatah beras yang diterima keluarga pegawai negeri dari pemerintah bergantung pada berapa anak yang mereka punya. Insentif yang lain termasuk pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga peserta KB.¹⁰⁵

99. Ada juga insentif negatif. Seperti Natalia, Lucia Maria Pereira memahami bahwa suaminya, Carlito das Regras, anggota Hansip dari Same, dapat dihukum jika ia tidak setuju menggunakan kontrasepsi. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa istri-istri Hansip di Same dipaksa ikut program itu, tanpa mengindahkan apakah mereka masih atau tidak lagi dalam usia bisa hamil. Jika seorang istri menolak ikut serta, tentara Indonesia akan memasukkan suaminya ke dalam air.¹⁰⁶ Hukuman lainnya, yaitu tidak dinaikkan pangkat, dialami oleh Florindo da Conceição Mendonça Da Costa. Selama enam tahun, dari 1980 sampai 1986, Florindo dan istrinya, Raimunda Da Conceição, tidak mau ikut dalam program itu. Selama waktu itu ia pangkatnya tetap prajurit satu, sementara rekan-rekannya, yang istrinya ikut keluarga berencana, telah naik pangkat. Pada 1986, suami-istri itu akhirnya memutuskan untuk tunduk. Raimunda mendaftarkan diri dalam program keluarga berencana. Suaminya segera mendapat kenaikan pangkat dan naik terus sampai akhirnya menjadi sersan mayor pada 1999. Tapi, keputusan ini berakibat menyakitkan bagi Raimunda. Ia diberi susuk, pil, dan spiral, tetapi semuanya mempunyai akibat sampingan yang buruk. Pada permulaan 1989, tidak lama setelah ia mulai menggunakan spiral, ia jatuh pingsan:

Untung suami saya pas pulang dari kantor. Begitu melihat saya tergeletak di lantai, ia langsung membawa saya ke Puskesmas Oecussi Kota serta mencari dokter agar bisa memberikan P3K [pertolongan pertama]. Akan tetapi dokter tidak menghiraukan, sehingga sempat terjadi sedikit kekacauan dan keributan di Puskesmas. Suami saya memberikan ancaman ultimatum kepada dokter itu, "Kalau terjadi sesuatu pada istri saya, maka kamu yang bertanggung jawab." Pada awalnya dokter itu tidak mau mengeluarkan jenis KB itu [spiral] dari

tubuh saya, akan tetapi suami saya tetap bersikeras dan menuntut mereka untuk membuat surat rujukan ke Rumah Sakit Umum Oecussi agar secepatnya harus mengeluarkan jenis KB itu dari tubuh saya. Saat itu ada dua orang bidan...yang mengeluarkan KB itu dari tubuh saya.

100. Baru setelah itu Raimunda diberi kontrasepsi suntik, dan ia tidak mengalami akibat sampingan. John Fernandes berpendapat bahwa kelalaian tidak mengobati akibat sampingan seperti yang diderita Raimunda mungkin merupakan kelalaian yang sistematis. Ia juga berkata bahwa jika ada akibat sampingan, perawatan dilakukan secara diskriminatif, perempuan Indonesia lebih diutamakan daripada perempuan Timor-Leste:

...untuk mengobati efek samping dari KB tersebut sebenarnya sudah ada obat khusus dari pusat, tetapi para perawat/bidan yang bekerja di rumah sakit pilih muka, obat itu khusus diberikan kepada para istri orang Indonesia, sedangkan orang Timor-Leste sendiri yang menderita efek samping dibiarkan saja.

101. Sering ada tuduhan bahwa tujuan Indonesia menjalankan program keluarga berencana bukanlah untuk memperbaiki kesehatan perempuan Timor-Leste, tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih buruk.¹⁰⁷ Tuduhannya adalah bahwa program itu dimaksudkan sebagai bagian dari strategi genosida yang bertujuan memusnahkan penduduk asli yang sudah sangat berkurang jumlahnya akibat adanya pemindahan penduduk dan kelaparan, dan memindahkan lebih banyak transmigran ke wilayah ini.^{*} Tuduhan lain yang pernah disampaikan adalah bahwa sterilisasi paksa pernah dilakukan tanpa pengetahuan atau persetujuan si perempuan. Komisi telah menyelidiki tuduhan-tuduhan serius ini. Komisi tidak menemukan adanya bukti untuk mendukung tuduhan-tuduhan ini. Memang pada dasawarsa 1980-an anak perempuan Timor-Leste diberi tiga kali suntikan dalam waktu satu tahun. Anak laki-laki dan anak perempuan Indonesia yang usianya sama tidak dimasukkan dalam program itu. Baik anak-anak perempuan itu atau pun orangtua mereka tidak diberi penjelasan apa pun mengenai penyuntikan itu kecuali bahwa suntikan itu “baik untuk kesehatan mereka”, dan penyuntikan itu dilakukan secara paksa. Isabel Galhos menceritakan apa yang terjadi padanya ketika ia masih duduk di kelas empat sekolah dasar:

[Adik perempuan, kakak laki-laki, dan saya] bersekolah di SD Tuana Laran, Vila Verde dekat katedral [Dili]...Tidak diumumkan kami ada suntikan seperti itu. Tidak ada...Waktu itu siang, kami semua sudah mau pulang, sekitar jam 11.00 kalau tidak salah. Kami sudah mau pulang, tiba-tiba pintu semua tertutup, jendela juga ditutup...

.....
* Sarah Storey menyatakan: “Kebijakan pengendalian kelahiran yang bersifat memaksa yang diterapkan pada Timor-Leste oleh Indonesia, ketika dipadukan dengan strategi pemindahan pendatang baru Indonesia ke Timor-Leste, secara pelan-pelan akan mencegah segala tuntutan atas hak penentuan nasib sendiri di Timor-Leste dalam jangka panjang.” Storey, “Coercive Birth Control,” halaman 1.

[murid] yang laki-laki sudah keluar, perempuan tinggal di dalam... kami teriak di dalam karena tiba-tiba pintu, jendela ditutup. Para guru, yang khususnya laki-laki, masuk bersama ibu kepala sekolah. Kami langsung disuntik...[Kami] kabur, lari sana, lari sini, ditangkap, dipegang baru disuntik...Saya memang orangnya takut sekali pada suntikan. Saya dipegang [oleh dua orang laki-laki]. Mereka bilang, "Kalau kamu tidak mau, paha saja disuntik." Perempuan, kami semua disuntik.¹⁰⁸

102. Sejumlah orang Timor-Leste mengambil kesimpulan bahwa anak-anak perempuan itu diberi suntikan sterilisasi. Bahkan orang Timor-Leste yang terkemuka pun menaruh kecurigaan. Mantan Gubernur Timor Timur, Mario Carrascalão, mengatakan kepada Komisi bahwa pada permulaan dasawarsa 1980-an (ia tidak ingat tanggalnya), ia menerima kunjungan dari beberapa orangtua murid yang ingin tahu mengapa anak perempuan mereka yang dalam usia anak sekolah diberi suntikan dan apakah suntikan itu untuk sterilisasi. Ia kemudian bertanya kepada kepala dinas kesehatan setempat, seorang Indonesia, mengapa hanya anak-anak perempuan yang disuntik dan mengapa program itu dijalankan secara sembunyi-sembunyi. Pejabat itu mengatakan bahwa anak-anak itu diberi suntikan anti-tetanus, tetapi tidak dapat menerangkan mengapa dilakukan secara rahasia atau meredakan kecurigaan bahwa pemerintah sedang mengadakan program sterilisasi percobaan. Uskup Belo berpendapat bahwa perempuan-perempuan yang tidak terdaftar dalam program Keluarga Berencana, apapun sebabnya, secara rutin disterilkan ketika mereka masuk rumah sakit untuk menjalani operasi. Menurut Isabel Galhos, Uskup Belo mengeluarkan surat pastoral mengenai hal ini.¹⁰⁹

103. Komisi berkonsultasi dengan Dr. José Guterres, dari Family Health International* untuk meminta penjelasan mengapa para petugas kesehatan mengkhhususkan anak-anak perempuan Timor-Leste untuk diberi imunisasi dengan cara yang disampaikan oleh Isabel Galhos. Dr. Guterres mengatakan bahwa panduan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) menganjurkan bahwa anak-anak perempuan di negara-negara yang sedang berkembang, yang menghadapi risiko besar terkena tetanus pada waktu melahirkan, perlu diimunisasi terhadap tetanus dengan jadwal seperti berikut:

- Imunisasi pertama sedini mungkin pada umur seseorang dapat melahirkan atau secepat mungkin selama kehamilan
- Imunisasi kedua paling sedikit empat minggu setelah imunisasi pertama
- Imunisasi ketiga paling sedikit enam bulan setelah imunisasi kedua

104. Karena itu, menurut Dr. Guterres, jadwal yang dikatakan oleh perempuan-perempuan yang telah disuntik itu sesuai dengan panduan WHO untuk mencegah tetanus. Dr. Guterres juga berpendapat bahwa pada prinsipnya memang masuk akal jika anak-anak perempuan Indonesia tidak disuntik karena mereka kemungkinan

* Dr. José Guterres menyelesaikan pendidikan kedokteran di satu universitas di Indonesia dan pernah berpraktik di pos kesehatan di Ainaro.

telah mendapat suntikan antitetanus sebagai bagian dari program imunisasi ketika mereka masih kanak-kanak, sedangkan anak-anak Timor-Leste, terutama yang pada waktu mereka berusia di bawah lima tahun ikut melarikan diri ke hutan, mungkin sekali belum pernah diimunisasi.

105. Tuduhan bahwa program KB bertujuan untuk mengurangi penduduk Timor-Leste agar jumlah penduduk transmigran dapat ditambah tidak didukung oleh kesaksian Carlito das Regras, yang mencatat bahwa seperti istri-istri tentara, transmigran juga diharuskan melakukan pembatasan kelahiran. Dalam hal para transmigran, persetujuan mereka untuk ikut dalam program itu merupakan prasyarat sebelum diterima sebagai transmigran.¹¹⁰

106. Akhirnya, bukti yang paling menentukan bahwa tidak ada program sterilisasi paksa adalah bahwa perempuan Timor-Leste, termasuk yang sudah disuntik pada awal dasawarsa 1980-an dalam keadaan yang diuraikan di atas, tidak menjadi mandul sebagai akibatnya.¹¹¹

107. Memang tuduhan-tuduhan mengenai sterilisasi paksa mungkin tidak terbukti, tetapi apa yang tidak dapat disangkal adalah bahwa cara program imunisasi itu dilaksanakan samasekali tidak mengurangi ketakutan mendalam orang Timor-Leste mengenai kegunaannya. Seperti dikatakan oleh Miranda Sissons:

Apakah desas-desus meluas mengenai penyuntikan paksaan itu beralasan atau tidak, serangkaian kejadian ini menyebabkan kebanyakan perempuan Timor-Leste sangat mencurigai segala jenis penyuntikan, termasuk yang dijalankan dalam program vaksinasi biasa oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus, anak-anak perempuan dikeluarkan oleh orangtuanya dari sekolah menengah sebagai akibatnya.¹¹²

108. Luasnya keyakinan di kalangan orang Timor-Leste bahwa orang Indonesia berusaha mengurangi pertumbuhan penduduk sebagai bagian dari strategi genosida jelaslah sangat menambah rasa tidak senang terhadap pendudukan dan rasa tidak percaya pada maksud-maksud pemerintah Indonesia berkenaan dengan kesejahteraan rakyat Timor-Leste. Selain itu, tuduhan ini, paling sedikit, menggambarkan kurangnya informasi yang diberikan kepada pasien dalam sistem pelayanan kesehatan yang caranya paternalistik. Kurangnya informasi dan pendidikan kesehatan ini menyebabkan tidak mungkin memperoleh persetujuan pasien yang biasanya diberikan setelah menerima informasi, dan memperdalam suasana ketakutan yang menyelimuti mereka. Tidak adanya rasa percaya kepada staf dan pelayanan kesehatan Indonesia juga berakibat pada kesehatan penduduk pada umumnya, karena mereka menjadi enggan mencari perawatan atau nasihat kesehatan untuk mencegah penyakit.

Kesehatan jiwa dan trauma

109. Trauma psikologis adalah salah satu dari warisan yang bertahan lama dari setiap konflik. Komisi tidak dapat menaksir banyaknya orang yang menjadi sasaran, atau menyaksikan atau dipaksa melakukan tindakan-tindakan kekerasan ekstrem, termasuk penyiksaan, perkosaan, dan pembunuhan. Pengeboman dari udara selama berbulan-bulan dan kematian besar-besaran yang diakibatkannya masih terus menghantui mereka yang dulu mencari perlindungan di gunung-gunung. Sejumlah besar orang pernah terpaksa meninggalkan rumah mereka, banyak di antaranya berkali-kali. Puluhan ribu orang rumahnya dibakar dan miliknya dijarah atau dimusnahkan, banyak yang mengalaminya lebih daripada sekali. Banyak saksi yang mengatakan kepada Komisi bahwa mereka terpaksa meninggalkan anak-anak dan orang-orang tua sehingga mati, karena mereka terpaksa melarikan diri dari serangan militer Indonesia dan kaki tangannya.

110. Penelitian dari negeri-negeri lain yang telah keluar dari konflik menunjukkan bahwa antara 1% dan 2% dari mereka yang menderita trauma akibat perang akan menderita gangguan jiwa yang berat. 5-15% lainnya akan menderita gangguan tekanan jiwa pascatrauma (*post-traumatic stress disorder* atau PTSD), yang tampak dari berbagai macam gejala, dari depresi jangka panjang sampai gangguan tidur. PTSD dapat segera menghinggapi penderita, atau baru muncul setelah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah kejadiannya. Penduduk selebihnya akan pulih dengan bantuan mekanisme pendukung dari masyarakat atau keluarga, pengobatan tradisional, kepercayaan, dan ritual agama—atau semata-mata karena kehidupan sehari-hari, di mana pekerjaan berperan menentukan untuk memulihkan jati diri mereka.¹¹³

111. Pada 2000, suatu survei awal yang independen mengenai trauma dan penyiksaan dilakukan di komunitas di semua distrik di Timor-Leste, dengan mewawancarai kepala-kepala keluarga. Dari 1.033 responden yang disurvei, 97% mengatakan mereka mengalami kejadian traumatis dan 34% digolongkan menderita PTSD.¹¹⁴ Sebagian dari temuan-temuan survei ini adalah:

- 76% mengalami situasi pertempuran
- 64% mengalami kehilangan tempat tinggal
- 60% mengalami keadaan tidak sehat tanpa mendapat perawatan medis
- 57% mengalami suatu jenis penyiksaan*
- 31% kehilangan ayah karena kekerasan politik
- 24% kehilangan ibu karena kekerasan
- 22% menyaksikan pembunuhan anggota keluarga atau teman
- 22% punya anak yang terluka atau terpisah dari mereka
- 14% kehilangan suami/istri akibat kekerasan

* Hanya 5% dari responden yang mengatakan bahwa mereka diperkosa, tapi perkosaan adalah tindak kejahatan yang sering tidak dilaporkan (lihat Bab 7.7: Kekerasan Seksual).

- 12% kehilangan anak akibat kekerasan
- 20% merasa yakin bahwa diri mereka tidak akan pulih dari pengalaman-pengalaman mereka
- 41% merasa yakin bahwa mereka hanya akan sembuh jika mendapat pertolongan

112. Sebagian dari peristiwa-peristiwa ini merupakan bagian dari kedukaan perang. Tetapi, lain-lainnya merupakan hasil dari kebijakan keamanan semena-mena yang dijalankan oleh pihak militer Indonesia, yang dengan sengaja dirancang untuk merugikan kesehatan kejiwaan orang-orang yang dicurigai melawan pendudukan. Teknik-teknik penyiksaan dalam tahanan, selain untuk menimbulkan rasa sakit yang tidak terbayangkan, pada intinya dirancang untuk membuat si tahanan merasa samasekali tidak berdaya dan bergantung sepenuhnya pada kemauan si penahan, dan untuk menghancurkan harga diri dan keamanan pribadinya. Akibat jangka panjang dari perlakuan semacam itu tidak dapat dianggap enteng. Di kalangan penduduk pada umumnya, suasana ketakutan diciptakan secara sengaja dan sistematis sebagai bagian kebijakan menemor. Tidak ada contoh yang lebih jelas lagi dari kebijakan yang akibatnya membawa kemunduran dalam merealisasikan hak akan standar kesehatan jiwa yang dapat dicapai setinggi mungkin. Pemindahan paksa besar-besaran, masa ketidakpastian makanan, dan kelaparan yang parah dan berlangsung lama, terpisah dari keluarga, serta pemerintah yang otoriter juga memberikan tekanan kejiwaan dan perasaan yang berat pada anggota-anggota masyarakat.

113. Keparahan dari pelanggaran-pelanggaran hak atas kesehatan dibuat lebih buruk lagi oleh kegagalan pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Di masa pendudukan Indonesia, tidak ada pelayanan kesehatan jiwa, dan menurut sejumlah sumber, gangguan jiwa tidak dianggap sebagai masalah kesehatan.¹¹⁵ Komisi tidak mendengar adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keadaan kesehatan jiwa di Timor-Leste, baik melalui pelayanan resmi di rumah sakit maupun berupa konseling.

Perekrutan paksa

Perekrutan paksa oleh TNI, sebagai 'tenaga bantuan operasi' (TBO) dan sebagai perisai manusia, dalam operasi-operasi untuk menghalau keluar gerilya, yang paling terkenal di antaranya adalah Operasi Keamanan, telah dibahas di bagian lain dalam laporan ini (Lihat 3.11: Operasi Keamanan; 7.5: Pelanggaran Hukum Perang; dan 7.8: Pelanggaran Hak Anak).

Komisi mendokumentasikan 2.157 kasus perekrutan paksa. Seperti diperlihatkan Bagan 2, sebagian terbesar kasus ini dilaporkan terjadi pada 1999 dan 1977-1984. Analisis mengenai korban perekrutan paksa mengungkapkan bahwa 92,1% (1987/2157) adalah laki-laki

dan kelompok umur yang paling banyak adalah umur berdinan militer (antara 20 dan 34 tahun). Tapi, dibandingkan dengan jumlah penduduk, laki-laki dalam kelompok umur 50 - 54 menunjukkan tingkat perekrutan paksa tertinggi yang dilaporkan. Dari perekrutan paksa yang didokumentasikan oleh Komisi, pertanggungjawaban kelembagaan hampir sepenuhnya ada pada militer dan polisi Indonesia, serta orang-orang Timor-Leste kolaborator mereka. Ini diperlihatkan dalam Bagan 3.

Pernyataan-pernyataan naratif yang diterima oleh Komisi mengungkapkan bahwa orang-orang yang direkrut paksa, seperti sebagai TBO, pada umumnya tidak mendapat bayaran atas pekerjaannya dan kebanyakan diambil dari rumah dan keluarga mereka selama beberapa bulan untuk sekali waktu, dalam sebagian kasus bahkan selama lebih daripada satu tahun. Korban-korban perekrutan paksa utamanya adalah yang berada dalam usia produktif dalam kehidupan mereka dan, dalam banyak kasus, adalah penanggungjawab kehidupan keluarga mereka. Karena itu, kebijakan resmi pemerintah ini merupakan langkah mundur dalam hal hak untuk memilih pekerjaan dan menerima upah yang layak, serta hak untuk mendapatkan penghidupan.

Selain itu, perekrutan paksa punya dampak memundurkan hak atas kesehatan. TBO dan orang-orang lain yang direkrut paksa dihadapkan pada keadaan yang keras dan sering membahayakan. Mereka berjalan menempuh jarak jauh membawa beban berat, dan sering terperangkap dalam tembak-menembak. Juga ada laporan-laporan bahwa TBO digunakan sebagai perisai hidup, dipaksa berjalan di depan kesatuan mereka ketika berpatroli. Ada sejumlah kecil laporan tentang kematian dalam tembak-menembak, dan orang-orang yang direkrut paksa juga mati karena kelaparan, kelelahan, dan penyakit.

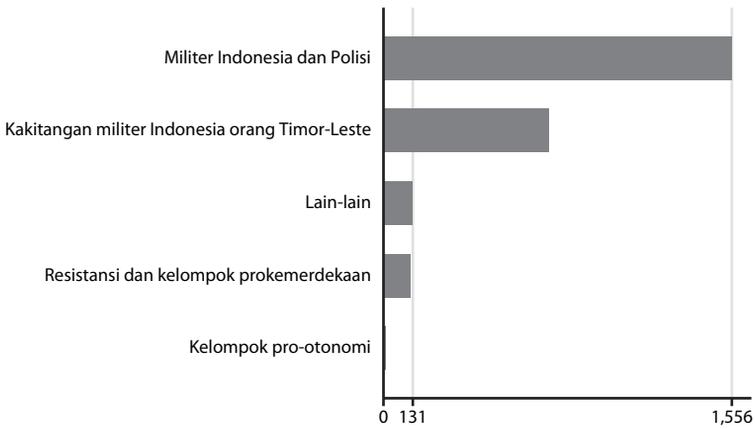
Terakhir, ketika anak-anak direkrut, kebijakan dan praktiknya jelas melanggar hak mereka atas pendidikan. Salah satu tujuan eksplisit hak atas pendidikan adalah melindungi anak-anak dari kerja eksploitatif dan membahayakan. Kebijakan militer merekrut anak-anak, banyak di antaranya dalam usia muda dua belas dan sebagian bahkan sepuluh tahun, untuk membantu dalam operasi-operasi tempur, mencapai tujuan sebaliknya, dengan sengaja membahayakan anak-anak tersebut. Komisi menemukan bahwa panduan militer yang menyatakan bahwa TBO harus dikembalikan ke sekolah setelah masa dinas selesai, sering dilanggar: dalam praktiknya, mereka bisa saja dibiarkan terlantar atau diculik ke Indonesia untuk dipekerjakan sebagai pelayan para prajurit yang sebelumnya mereka bantu.

Jumlah tindak rekrutmen paksa yang dilaporkan kepada Komisi, 1974 – 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada Komisi

Jumlah perekrutan paksa menurut pelaku, 1974 - 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada Komisi

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

Hak atas pendidikan

Hak atas pendidikan

Pendidikan, seperti juga kesehatan, adalah hak yang mutlak untuk realisasi hak-hak lainnya, dan sangat penting baik bagi perorangan maupun masyarakat. Komentar Umum 13 dari Komite tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah sarana utama yang dengannya orang dewasa maupun anak-anak yang secara ekonomi dan sosial terpinggirkan, dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan mendapatkan jalan untuk ikut-serta secara penuh dalam kehidupan komunitasnya.”¹¹⁶

Hak atas pendidikan memiliki ‘ciri-ciri mutlak’, yaitu ketersediaan (*availability*), bisa didapatkan (*accessibility*), bisa diterima (*acceptability*), dan bisa disesuaikan (*adaptability*).

- ‘Ketersediaan’ oleh Komite diukur dari jumlah dan mutu pengajaran, termasuk bangunan, fasilitas sanitasi, dan air minum, selain guru-guru terlatih yang mendapat gaji yang kompetitif secara domestik, bahan-bahan pengajaran, dan sebagainya.¹¹⁷
- ‘Bisa didapatkan’ ditafsirkan dalam pengertian fisik maupun ekonomi, dan tanpa diskriminasi atas dasar apapun yang telah dilarang.¹¹⁸
- ‘Bisa diterima’ mengharuskan pendidikan bersifat relevan, sesuai dengan budaya setempat, dan bermutu tinggi.¹¹⁹
- ‘Bisa disesuaikan’ mengharuskan pendidikan untuk tidak kaku sehingga dapat terus memenuhi kebutuhan siswa-siswa dalam lingkungan sosial dan budaya yang berbeda-beda.¹²⁰

Selain itu, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyatakan prinsip keseluruhan bahwa:

“Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan harkatnya, dan harus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang mendasar. [Negara-Negara Penandatanganan] selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa dan segala kelompok ras, etnis, dan agama, dan melanjutkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.”¹²¹

114. Kecuali pada dasawarsa terakhir pemerintahan kolonial Portugis, pendidikan tidak tersedia bagi kebanyakan penduduk Timor-Leste. Seperti halnya dengan sistem kesehatan, sistem pendidikan di bawah pemerintah Portugis pertama-tama hanyalah untuk memenuhi kebutuhan golongan elite kolonial dan pribumi.¹²² Sekolah menengah dapat dikatakan tidak ada selama sebagian besar periode penjajahan.¹²³

115. Tetapi, pada permulaan dasawarsa 1960-an, kebijakan Portugis berubah dan program pembangunan sekolah dilaksanakan. Dorongan utama dari perubahan ini adalah pemberontakan 1959, yang diyakini oleh negara tidak akan sampai terjadi jika rakyat tidak demikian “terbelakang”. Saldanha mencatat bahwa dari permulaan dasawarsa 1960-an sampai akhir masa kolonial, Gereja Katolik maupun pemerintah Portugis menggunakan pendidikan “sebagai strategi psikososial” (*acção psico-social*) untuk mengambil hati rakyat.¹²⁴ Pandangan mengenai pendidikan sebagai cara “mengambil hati dan pikiran rakyat” juga merupakan alasan eksplisit program pembangunan Indonesia.^{*}

116. Dari 4.898 pada tahun ajaran 1959/1960, jumlah murid sekolah dasar meningkat menjadi 57.579 pada tahun ajaran 1971/1972, sementara jumlah murid sekolah menengah meningkat dari 175 menjadi 1.275 pada periode yang sama. Tetapi, bahkan setelah adanya investasi ini, karena mulai dari dasar yang sangat rendah, pada waktu invasi Indonesia hanya kurang lebih 10% penduduk melek huruf.¹²⁵

117. Konsolidasi penguasaan Indonesia atas wilayah ini pada akhir 1979 segera disusul oleh kenaikan pesat investasi yang dimaksudkan untuk membawa pembangunan di Timor-Leste pada tingkat yang sejajar dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Salah satu prioritas utama dari program pembangunan untuk Timor-Leste adalah sektor pendidikan.[†] Investasi segera diarahkan untuk pembangunan sekolah-sekolah dan mendatangkan guru-guru dari Indonesia untuk meningkatkan pendaftaran masuk sekolah. Rp3,3 miliar disediakan untuk pendidikan pada tahun anggaran 1982/83-1988/89.[‡] Dari segi jumlah yang masuk sekolah, hasilnya sangat menonjol (lihat Tabel 9). Jumlah murid sekolah dasar naik menjadi 167.181 pada 1998. Ini berarti 70% dari anak usia sekolah telah masuk sekolah. Setiap desa memiliki paling sedikit satu sekolah dasar (walaupun tidak semuanya berfungsi). Ada 6.672 guru sekolah dasar yang mengajar di 788 sekolah dasar.¹²⁶ Terjadi kenaikan yang mencolok sekali dalam jumlah sekolah menengah: pada 1998, ada 114 sekolah menengah pertama, 37 sekolah menengah atas, dan 17 sekolah menengah kejuruan. Pada tahun itu pula, ada 32.197 murid di sekolah menengah pertama dan 18.973 di sekolah menengah atas. Didirikan juga sebuah

^{*} KORPRI, *20 Tahun Timor Timur Membangun*, 1996, secara khusus mencatat perlunya “Pendekatan Keamanan-Kesejahteraan” ABRI diimbangi dengan “Pendekatan Psikologis-Budaya” untuk mencapai stabilitas dan mengatasi perlawanan (halaman 240).

[†] BAPPEDA Tingkat I Timor Timur dan Universitas Kristen Satya Wacana, *Evaluasi Repelita IV Daerah Timor Timur*, UKSW, Salatiga, 1988, dikutip dalam Saldanha, halaman 144.

[‡] Karena tingginya tingkat korupsi dana yang dialokasikan dari pusat ini, tidak diketahui berapa yang sebenarnya dikeluarkan untuk sektor pendidikan. Lihat surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Presiden Soeharto yang mengungkapkan secara terperinci sebagian dari kesalahan alokasi ini, dikutip dalam Bagian 7:7.3 Pemindahan Paksa dan Kelaparan.

universitas nasional. Lajunya peningkatan ini menimbulkan persoalan kekurangan guru, terutama pada sekolah menengah dan perguruan tinggi, di mana kurangnya guru-guru paling terasa.¹²⁷

Tabel 9: Murid dan Guru di Timor-Leste 1998/1999

| | Sekolah | Murid | Jumlah Guru | Guru orang Timor-Leste | Perbandingan Murid & Guru |
|------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| Taman kanak-kanak | 66 | 2.168 | 183 | 30 | 12 |
| Dasar | 788 | 167.181 | 6.672 | 5.172 | 25 |
| Menengah Pertama | 114 | 32.197 | 1.963 | 65 | 16 |
| Menengah Atas | 37 | 14.626 | 1.059 | 87 | 14 |
| Menengah Atas Kejuruan | 17 | 4.347 | 478 | 55 | 9 |
| Universitas | 1 | 3.498 | 78 | 36 | 45 |
| Politeknik | 1 | 450 | 160 | 60 | 3 |
| Institut pertanian | 1 | 260 | 16 | 2 | 16 |
| Sekolah ekonomi | 1 | 473 | 32 | 17 | 15 |
| Pelatihan guru | 1 | 40 | 7 | 1 | 6 |
| Sekolah kesehatan | 1 | 400 | 32 | 12 | 13 |
| Total | 1.028 | 225.640 | 10.680 | 5.537 | 16 |

Sumber: BPS 1997, 1999; Sousa, 1999, dikutip dalam Pedersen dan Arneberg, halaman 91.

118. Walaupun tingginya kenaikan jumlah pendaftaran murid ini, kira-kira 30% anak-anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) tidak terdaftar di sekolah pada 1998. Ini sebagian disebabkan oleh terlambatnya pendaftaran dan tingginya angka yang mengulang kelas.¹²⁸ Biaya langsung pendidikan juga tinggi. Pada 1995, untuk 20% penduduk yang termiskin, pengeluaran bulanan untuk pendidikan adalah USD0,82 per orang (dihitung dengan nilai tukar uang 2001).¹²⁹

119. Seperti halnya dengan bidang kesehatan, investasi yang besar untuk pendidikan meningkatkan tersedianya gedung dan sarana, tetapi tidak menghasilkan perbaikan mutu. Pada 1998, persentase penduduk usia kerja yang tidak pernah menerima pendidikan masih 58% di Timor-Leste dibandingkan dengan 18% di Timor Barat.* Setelah 20 tahun investasi yang sangat besar, jumlah orang yang bisa baca-tulis banyak bertambah tetapi masih hanya 40%. Dengan demikian tingkat kemampuan baca-tulis di Timor-Leste adalah yang paling rendah dari semua provinsi di Indonesia dan dari semua negara di kawasan Asia Pasifik.¹³⁰

* SUSENAS 1998. Gomes mengutip persentase ini bukan untuk golongan "tidak pernah sekolah" seperti aslinya, tetapi sebagai "butahuruf". Namun, angka butahuruf yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi, karena sekolah belum tentu menjamin kemampuan baca-tulis. Gomes, halaman 205.

120. Mutu pengajaran merupakan bagian dari persoalan pendidikan. Antara 1983 dan 1998, terjadi kenaikan besar jumlah guru, kebanyakan datang dari Indonesia. Tetapi, rasio murid-guru masih tinggi di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan terutama perguruan tinggi (lihat Tabel 9, paragraf 117). Selain itu, sebagian besar guru tidak memiliki kualifikasi minimal untuk mengajar.* Tambahan lagi, seperti halnya dengan petugas kesehatan, banyak guru ditugaskan ke Timor-Leste segera setelah lulus dari pendidikan di Indonesia. Banyak dari mereka tidak suka tinggal di desa tempat mereka ditempatkan. Banyak yang mengambil pekerjaan kedua untuk menambah gajinya yang rendah (antara USD28-145 per bulan pada 1999).¹³¹ Akibatnya, guru sering tidak datang mengajar.¹³² Pengajaran dilakukan dalam bahasa Indonesia, yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh murid;¹³³ tidak seperti di Indonesia, bahasa-bahasa daerah dilarang digunakan di sekolah-sekolah, walaupun bahasa Tetum masih boleh digunakan sampai kelas 3 sekolah dasar untuk mempermudah pengajaran yang akan dilakukan sepenuhnya dalam bahasa Indonesia.¹³⁴ Buku-buku atau alat bantu mengajar tidak banyak, sehingga kemajuan murid hampir seluruhnya bergantung pada guru-guru mereka yang berbeda-beda mutunya.¹³⁵

Tabel 10: Kemiskinan dan Tingkat Pendidikan di Timor-Leste

| | 20% Termiskin | 21-40% | 41-60% | 61-80% | 20% Teratas | Rata-rata |
|---------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| Tidak sekolah | 75 | 71 | 67 | 49 | 28 | 58 |
| Sekolah Dasar tidak tamat | 13 | 13 | 11 | 14 | 8 | 12 |
| Tamat Sekolah Dasar | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 |
| Sekolah Menengah Pertama | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 |
| Sekolah Menengah Atas + | 2 | 4 | 6 | 18 | 41 | 14 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Pedersen dan Arneberg, halaman 108.

121. Seorang peneliti yang mewawancarai orang Timor-Leste yang dibesarkan selama masa pendudukan mencatat bahwa mereka sering menggambarkan pengalaman mereka di sekolah-sekolah Indonesia sebagai faktor penting yang memengaruhi perkembangan pandangan prokemerdekaan:

Hampir semua orang yang diwawancara berbicara mengenai buruknya mutu pendidikan yang diberikan oleh Indonesia. Ini terutama

* Perkiraan berkisar antara 30% (Gomes 1999), sampai 90% bagi guru sekolah dasar yang tidak memiliki kualifikasi mengajar. J. N. D. Carvalho, "Strategic Development Planning for East Timor; Education, Culture, Environment," makalah tidak diterbitkan, konferensi tentang *Strategic Development Planning for East Timor*, Melbourne, 5-9 April 1999.

terjadi di luar kota Dili. Di wilayah Ponta Leste...Honório de Araújo mengenang kembali ketika ia tamat sekolah waktu berumur 13 tahun, “Tidak ada samasekali yang berharga dalam otak saya. Pendidikan itu sangat primitif, anak-anak dihukum secara fisik. Selalu saja dilakukan hukuman badan. Seperti pendidikan militer, sangat keras dan kasar.”¹³⁶

122. Selain rendahnya mutu sarana dan pengajaran, persoalan mendasar pada sistem pendidikan di bawah Indonesia adalah apa yang diajarkan. Bukannya memfokuskan pada kebutuhan dasar pembelajaran,⁷ kurikulum jelas-jelas diarahkan untuk propaganda pro-Indonesia. Kurikulum dipandu oleh tujuan-tujuan pendidikan sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 2/1989:

- pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri
- pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh
- terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.¹³⁷

123. Masalah-masalah kelembagaan yang diuraikan di atas dan kurikulum di mana indoktrinasi memainkan peran besar tidak hanya terdapat di Timor-Leste; hal-hal ini pada kenyataannya biasa dalam pendidikan Indonesia. Pembacaan lima sila Pancasila setiap pagi merupakan upacara sehari-hari di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, dan mata pelajaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) merupakan keharusan untuk lulus dari sekolah dasar dan menengah. Pelajaran menghafal slogan-slogan dan lagu-lagu nasional, pengajaran sejarah versi yang telah disahkan pemerintah, menurut pada yang berwenang dan hormat tanpa boleh mempertanyakan yang berkuasa, ditekankan dengan mengorbankan pengembangan keterampilan dasar, khususnya pemikiran kritis dan pemecahan persoalan.[†] Kerusakan-kerusakan komunal di Indonesia sering secara resmi diterangkan sebagai akibat dari kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip

.....
* Deklarasi Dunia tentang Pendidikan, Pasal 1 mendefinisikan ‘kebutuhan pembelajaran dasar’ sebagai kemampuan baca-tulis, menghitung, pengungkapan lisan, dan kemampuan memecahkan masalah. Komite untuk HSEB Komentar Umum 13, paragraf 9, lebih lanjut menyatakan bahwa pendidikan “harus...mempertimbangkan budaya, kebutuhan, dan kesempatan masyarakat.” Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Konferensi Seluruh Dunia, Thailand, 5-9 Maret 1990.

† Carol Warren mengkaji pendekatan Orde Baru dalam melembagakan pemikiran Pancasila melalui kurikulum sekolah yang mencakup ‘Pendidikan Moral Pancasila’ dan permainan-permainan peran untuk penduduk desa. Dalam permainan peran, penduduk desa didorong untuk berlatih menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui “simulasi” di mana penduduk desa memainkan peran menjadi pejabat setempat dan anggota-anggota masyarakat menghadapi situasi seperti: “Pak Putu tidak mau ikut gotong-royong memperbaiki jalan karena menurutnya hanya sebagian kecil penduduk desa yang dapat memetik manfaat dari jalan tersebut. Sebagai kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Ibu Kartini mendapatkan masalah dengan IUD-nya dan datang kepada Anda, sebagai tetangga, meminta nasihat. Apa yang akan Anda katakan kepadanya?” Carol Warren, *Adat and Dinas: Balinese Communities in the Indonesian State*, Oxford University Press, New York, London, 1995.

yang mendasari negara kesatuan Republik Indonesia. Ini biasanya diikuti oleh pernyataan-pernyataan resmi aparat pemerintah mengenai perlunya rakyat setempat diberi pendidikan yang lebih baik mengenai Pancasila dan Wawasan Nusantara.

124. Tapi, seperti halnya dengan program pengendalian kelahiran, konteks invasi dan pendudukan memberi dimensi tambahan pada kebijakan-kebijakan ini. Meski secara eksplisit penggunaan propaganda dalam konteks pendidikan bertentangan dengan semangat hak atas pendidikan dalam konteks apapun,^{*} dalam suatu wilayah pendudukan, indoktrinasi yang bertujuan mendukung tujuan integrasionis penguasa pendudukan memiliki warna represif yang lebih kuat.

125. Dokumen-dokumen militer dan laporan-laporan pemerintah menekankan perlunya “memasyarakatkan” pembangunan, yang dilukiskan sebagai salah-satu dari dua cara untuk mengatasi Resistansi terhadap integrasi dengan Indonesia (yang lainnya adalah Pendekatan Pertahanan Keamanan).¹³⁸ Militer mempunyai tanggung jawab menjalankan kedua pendekatan ini. Di banyak daerah pedesaan, anggota-anggota militer merangkap sebagai guru.¹³⁹

126. Dokumen-dokumen resmi juga jelas menyatakan bahwa mengajarkan bahasa Indonesia adalah tugas inti dari sistem pendidikan, baik sebagai cara untuk menjelaskan manfaat integrasi maupun sebagai cara melakukan kontrol.[†] Kecenderungan kuat untuk mengajarkan nilai-nilai penguasa pendudukan dicerminkan dalam perincian buku-buku wajib yang dipesan untuk digunakan di sekolah-sekolah: antara 1984 dan 1989 pemerintah membeli 161.560 buku wajib untuk pelajaran bahasa Indonesia, 39.926 buku pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, dan 9.398 buku pelajaran ilmu pengetahuan alam.¹⁴⁰ Tidak dapat disangsikan lagi bahwa kampanye mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah telah berhasil: pada 1998, 99% dari anak-anak yang berumur antara 10 dan 19 tahun, dan 85% dari orang-orang yang berumur 20 - 29 tahun dapat berbicara bahasa Indonesia (dibandingkan dengan 20% dari orang yang berumur 60 tahun ke atas).¹⁴¹

127. Propaganda dalam bidang pendidikan tidak terbatas pada anak-anak sekolah. Program-program pendidikan masyarakat untuk orang dewasa mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, bahasa Indonesia “yang terdiri dari pengetahuan

.....
^{*} CRC, Pasal 29(1). Komite Hak Anak menyatakan: “Pasal 29(1) mendesak agar pendidikan berpusat pada anak, bersahabat dengan anak, dan memberdayakan...Pendidikan yang merupakan hak setiap anak harus dirancang untuk memberikan keterampilan kepada anak, meningkatkan kemampuan anak untuk bisa menikmati segala jenis hak asasi manusia, dan memajukan budaya yang menghormati nilai-nilai hak asasi manusia,” dan “menekankan perlunya pendidikan dirancang dan diberikan sedemikian rupa sehingga bisa memajukan dan memperkuat berbagai nilai etis yang terkandung dalam Konvensi, termasuk pendidikan untuk perdamaian, toleransi, dan penghargaan kepada lingkungan, dalam cara yang menyeluruh dan terpadu.” Komite tentang Hak Anak-Anak, Komentar Umum 1: Tujuan Pendidikan, Dokumen PBB CRC/GC/2001/1, 17 April 2001, paragraf 2 dan 13.

[†] “...pembangunan pendidikan nasional mengusahakan: pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh, yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkul setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.” Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur, *20 Tahun Timor Timur Membangun*, halaman 181.

dan keterampilan dasar untuk keperluan hidup sehari-hari, sikap pembaharuan dan pembangunan.”¹⁴² Propaganda tidak hanya ditujukan untuk memengaruhi mereka yang sedang menjalani pendidikan formal, tapi generasi muda pada umumnya. Sebagai contoh, sebuah dokumen yang menguraikan sasaran pendidikan untuk Timor-Leste pada 1996, sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahun yang Keenam, berisi satu bagian berjudul “Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Khususnya di Lingkungan Generasi Muda” (menyusul satu bagian berjudul “Penanggulangan Masalah Sosial”):

Perkembangan permasalahan di Timor Timur akhir-akhir ini senantiasa diwarnai dengan gejolak-gejolak sosial yang ditimbulkan oleh kalangan generasi muda. Untuk mengantisipasi gejolak-gejolak seperti itu, maka upaya-upaya yang ditempuh antara lain melalui: pembinaan secara khusus kepada para siswa Sekolah Dasar sampai dengan SLTA di seluruh Timor Timur, antara lain dengan memasyarakatkan Sejarah Integrasi Timor Timur. Upaya lainnya adalah melalui pembinaan secara khusus kepada para mahasiswa, baik yang belajar di Timor Timur, maupun yang belajar di luar Timor Timur.¹⁴³

128. Pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam dokumen-dokumen resmi ini memberikan kepada kita bukan saja pengertian tentang pemikiran resmi mengenai pendidikan, tetapi juga mengenai betapa dalamnya salah pengertian negara mengenai sumber ketidakpuasan orang Timor-Leste dan tidak efektifnya “pembangunan” sebagai jalan keluar yang diberikan oleh Indonesia dalam suatu suasana yang sangat militeristis dan menindas. Untuk memberi gambaran mengenai hal ini, dalam pembelaannya atas tuduhan subversi berkenaan dengan demonstrasi di Jakarta pada 19 November 1991 untuk memprotes pembantaian di Santa Cruz, ketua perhimpunan mahasiswa Renetil, Fernando de Araújo, menyatakan bahwa penentuan nasib sendiri tidak dapat ditukar dengan jalan beraspal dan simbol-simbol pembangunan lainnya:

Kalau saja rakyat Timor Timur sudah berjiwa materialis kemungkinan mereka dapat menerima pembangunan itu sebagai ganti dari hak asasi mereka... Hak kemerdekaan, hak kebebasan tidak dapat ditukar dengan mobil plat merah, jalan aspal, dan barang-barang lainnya... Hak kami untuk berhubungan dengan negara-negara lain, hak kami untuk mengolah kekayaan alam kami, hak kami untuk meminta bantuan kepada luar negeri dengan mengatakan rakyat Timor Timur masih serba kekurangan (seperti yang sering dilakukan oleh pemerintah ini)—semua hak ini telah diambil dari kami. Jangan hanya melihat pada apa yang telah didapat di tangan tapi hendaknya harus mempelajari juga bagaimana proses untuk mendapatkannya.¹⁴⁴

Temuan

Temuan umum

Komisi menemukan bahwa:

129. Dengan menggunakan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) dan instrumen-instrumen internasional lain yang relevan sebagai standar, Indonesia gagal memenuhi tanggung jawab utamanya sebagai Negara dalam hal ekonomi dan sosial dan gagal melakukan segala upaya untuk secara bertahap merealisasikan hak-hak tersebut sesuai dengan kemampuannya.

130. Indonesia berkali-kali gagal untuk melaksanakan tanggung jawab utamanya berkaitan dengan hak ekonomi dan sosial. Indonesia tidak memenuhi kebutuhan dasar penduduknya atas makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan dasar. Dengan mengalokasikan dananya secara selektif, baik dengan memberikan dana ini ke kelompok tertentu atau menahan dana yang seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan, Indonesia telah bertindak secara diskriminatif. Indonesia berulang-ulang melakukan tindakan yang justru mengakibatkan situasi sosial dan ekonomi penduduk menjadi merosot, atau dengan kata lain melakukan langkah-langkah mundur.

131. Kegagalan Indonesia memenuhi tanggung jawab utamanya kepada penduduk Timor-Leste terjadi secara teratur di seluruh masa pendudukan. Misalnya, perlakuan terhadap orang Timor-Leste yang “dimukimkan kembali” setelah mereka menyerah atau ditangkap pada akhir dasawarsa 1970-an, dan dampak politik bumi hangus yang dilakukan TNI dan milisi sekutu mereka pada 1999, merupakan contoh nyata kebijakan yang menimbulkan pengingkaran hak-hak ekonomi dan sosial penduduk, yang berakibat sangat negatif pada hak-hak mereka untuk menikmati standar hidup yang layak, mendapatkan penghidupan, tingkat kesehatan, dan pendidikan yang paling tinggi, dan untuk melakukan pekerjaan yang dipilih secara bebas.

132. Walaupun Indonesia mengaku telah melakukan pembangunan di Timor-Leste, pada kenyataannya pemerintah Indonesia tidak memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial penduduk Timor-Leste sampai tingkat yang setinggi mungkin.

133. Penguasa Indonesia, baik militer maupun sipil, mengabaikan ketetapan-ketetapan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1907 tentang kewajiban penguasa pendudukan untuk menghormati hak-hak ekonomi dan sosial penduduk di wilayah yang diduduki. Mereka melanggar kewajiban khusus mereka untuk tidak menghancurkan atau merampas harta benda secara sewenang-wenang, tidak mengambil keuntungan dari sumberdaya di wilayah pendudukan, dan tidak memaksa penduduk di wilayah pendudukan untuk menjalani wajib militer dalam pasukan penguasa pendudukan. Seperti telah dicatat di atas, Indonesia juga tidak memenuhi kewajiban mereka untuk menyediakan kebutuhan dasar berupa makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal, sehingga tidak hanya melanggar standar-standar yang telah ditetapkan di dalam Kovenan Internasional

tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tetapi juga kewajiban mereka menurut hukum kemanusiaan internasional.

134. Banyak tindakan penguasa Indonesia selama masa pendudukan berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial penduduk Timor-Leste yang berjangka panjang dan dalam banyak kasus dirasakan sampai sekarang. Perampasan sumberdaya alam, seperti kayu, yang ditebang sampai menyisakan pada tingkat yang rendah, sehingga dalam jangka panjang memengaruhi kesejahteraan penduduk. Yang tidak kalah parahnyanya adalah dampak sosial dari tindakan-tindakan ini. Penggunaan sumberdaya secara diskriminatif menimbulkan perpecahan baru dan melanggengkan perpecahan yang sudah ada. Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang untuk memindahkan penduduk dan untuk mengusir mereka secara paksa berakibat pada ketidakpastian hak kepemilikan tanah dan adanya orang yang tidak memiliki tanah sama-sekali. Berbagai jenis teror terhadap sebagian besar penduduk, yang meliputi penyiksaan, pembunuhan, dan perkosaan, merusak kesehatan mental orang Timor-Leste dalam jumlah yang tidak diketahui. Komisi berpendapat bahwa segala dampak sosial ini menjadi hambatan dalam proses rekonsiliasi dan perlu diselesaikan dalam konteks tersebut.

135. Timor-Leste bukan satu-satunya wilayah di bawah kekuasaan Indonesia yang mengalami pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial selama masa pendudukan. Banyak pelanggaran di atas juga terjadi di Indonesia sendiri dalam periode yang sama. Namun, karena kontrol militer di Timor-Leste sangat tinggi dan akibat konteks invasi dan pendudukan di Timor-Leste, pelanggaran-pelanggaran ini lebih intens dan membatasi kemampuan penduduk untuk memperbaikinya melalui pencarian ganti rugi atau sarana-sarana yang lainnya.

Temuan spesifik

Hak atas standar hidup yang layak

Pembangunan dan pengeluaran pemerintah

136. Meskipun investasi pemerintah Indonesia di Timor-Leste sangat besar dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama jika dibandingkan dengan masa pemerintah kolonial Portugis, yang mengarahkan distribusi investasi ini terutama adalah kepentingan keamanan pemerintah, bukan kepentingan masyarakat Timor-Leste. Perbedaan antara investasi dan pertumbuhan di sektor-sektor seperti transportasi, komunikasi, dan administrasi pemerintahan, dan di sisi lain pertanian yang menjadi penopang kehidupan sebagian besar penduduk, jelas menunjukkan distorsi prioritas penguasa pendudukan. Indikator pendapatan dan kemiskinan pada akhir pendudukan Indonesia, yang menunjukkan Timor-Leste berada di bawah negara-negara lain dan semua provinsi di Indonesia, memberikan bukti kuat tentang dampak merugikan dari pilihan prioritas penguasa pendudukan pada kondisi kehidupan sebagian besar rakyat Timor-Leste.

Hak atas sumberdaya alam

137. Komisi merasa yakin bahwa perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan militer dan pemerintah Indonesia secara sengaja dan sistematis membayar para petani kopi dengan harga yang sangat rendah, sehingga sama saja dengan membatasi hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

138. Aturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia di sektor industri kopi merupakan salah satu hal di mana pemerintah Indonesia mengabaikan salah satu unsur penting hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri, yaitu hak untuk memanfaatkan kekayaan alam dan sumberdaya alam secara bebas. Penguasa Indonesia melakukan pelanggaran yang sama saat mereka mengeksploitasi sumberdaya alam seperti cendana dan kayu, tanpa mempertimbangkan keberlangsungannya dan karena tidak membuat aturan tentang eksploitasi sumberdaya ini oleh pihak lain. Bentuk-bentuk eksploitasi sumberdaya alam ini juga sangat merugikan kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk membiayai operasi militer, dan karena itu melanggar kewajiban penguasa penduduk.

139. Komisi menemukan bahwa Indonesia dan Australia menandatangani Perjanjian Celah Timor pada 1989 tanpa melakukan konsultasi dengan penduduk Timor-Leste atau menghormati kepentingan mereka, dan ini merupakan pelanggaran lebih lanjut terhadap hak rakyat Timor-Leste untuk memanfaatkan sumberdaya alam.

Hak untuk mendapatkan makanan yang layak

140. Pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang justru memperburuk keadaan makanan rakyat Timor-Leste. Cuaca di Timor-Leste dan mutu tanah yang tidak sama membuat situasi makanan rentan bahkan pada waktu-waktu yang terbaik sekalipun, dan kemampuan bertahan hidup bergantung pada kemampuan penduduk untuk bergerak secara bebas. Komisi menemukan bahwa penguasa Indonesia tidak hanya mengabaikan pertanian; mereka juga mengambil tindakan keamanan yang justru menurunkan kesempatan penduduk petani untuk bertahan hidup, terutama dengan memaksa mereka pindah ke tempat-tempat yang tanahnya tidak subur dan yang di dalamnya gerak mereka dibatasi.

Perumahan dan tanah

141. Komisi menemukan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik—Fretilin, UDT, dan pasukan keamanan Indonesia dan kakitangannya—melakukan kegiatan, termasuk pemindahan paksa, penghancuran rumah dan harta benda lainnya, dan perampasan barang, yang melanggar hak atas perumahan.

142. Komisi menemukan bahwa pemindahan yang dilakukan berulang-ulang, perubahan batas wilayah administrasi, dan tidak diakuinya kepemilikan tanah dan praktik tata-guna tanah menurut adat mengakibatkan sengketa tanah yang sangat rumit dan adanya orang-orang yang tidak mempunyai tanah. Meskipun pertimbangan keamanan memainkan peran penting dalam hal ini, kepentingan ekonomi yang tak terkontrol dari pejabat militer dan sipil serta rekan-rekan usaha

mereka juga merupakan faktor yang sangat penting. Kekacauan kepemilikan tanah dan pola tata guna tanah sudah dan masih mempunyai dampak merusak pada ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Timor-Leste.

Hak atas kesehatan dan pendidikan

143. Walaupun investasi Indonesia di bidang pendidikan dan kesehatan sangat besar dan menghasilkan adanya sarana fisik sistem kesehatan dan pendidikan di seluruh Timor-Leste, Komisi menemukan bahwa sistem pendidikan dan kesehatan ini tidak efektif mengatasi persoalan kesehatan masyarakat atau memenuhi kebutuhan dasar pembelajaran.

144. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Yang termasuk akibat sampingan dari pelanggaran yang ekstrem, seperti penyiksaan dan perekrutan paksa, adalah buruknya kesehatan dan pendidikan yang terhambat. Pembangunan ekonomi yang berat sebelah yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia menciptakan lingkaran yang berkelanjutan di mana kemiskinan pada satu sisi, dan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan di sisi lain, saling memperkuat. Konteks militerisasi yang begitu tinggi dan faktor-faktor struktural lainnya, seperti kurangnya kemampuan dan kemauan petugas kesehatan dan guru Indonesia yang ditugaskan di Timor-Leste, menghasilkan layanan berkualitas rendah dan tidak dipercaya oleh penduduk setempat. Kebutuhan kesehatan dasar dan pendidikan sering dikalahkan oleh pertimbangan keamanan, seperti diperlihatkan dalam kasus pemindahan paksa sejumlah besar penduduk ke wilayah yang terjangkiti penyakit yang sebelumnya tidak diperhatikan dan pengutamaan pada propaganda di sekolah-sekolah.

145. Pelaksanaan program Keluarga Berencana di Timor-Leste sama-sekali bertentangan dengan prinsip yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hak atas kesehatan, yaitu kebebasan untuk mengontrol kesehatan dan badan seseorang dan hak untuk mendapatkan informasi yang memungkinkannya memiliki kontrol tersebut. Komisi menemukan bahwa ada unsur paksaan dalam program Keluarga Berencana, yang diperkuat oleh pendekatan yang mengejar target dan keterlibatan militer secara langsung dalam perancangan dan pelaksanaan program. Program ini juga dilaksanakan dengan mengabaikan akibat sampingan nyata metode-metode pembatasan kelahiran yang digunakan.

146. Kecurigaan yang muncul karena pendekatan otoriter dalam perawatan pasien tecermin dalam luasnya kepercayaan yang diberikan kepada tuduhan bahwa Indonesia secara rahasia melakukan kampanye sterilisasi paksa yang bertujuan untuk memusnahkan bangsa Timor-Leste. Komisi tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan ini, tetapi tuduhan semacam ini menunjukkan adanya kecurigaan yang muncul akibat pendekatan otoriter dalam pelayanan kesehatan di mana petugas kesehatan merasa tidak wajib memberikan informasi kepada pasien mengenai perawatan mereka.

147. Digunakannya sekolah untuk propaganda dan indoktrinasi sangat menghambat pendidikan satu generasi muda Timor-Leste. Pendidikan digunakan dengan cara ini

sebagai bagian dari pendekatan keamanan terpadu yang tujuan terbesarnya adalah untuk menjamin agar dukungan kepada prokemerdekaan tidak sampai berakar pada generasi baru. Dalam konteks ini, mengajari anak-anak keterampilan yang akan meningkatkan kesempatan dan kemampuan mereka untuk merealisasikan potensi mereka sebagai manusia, tidak diutamakan.

Catatan akhir

1. Joint Assessment Mission, *East Timor – Building a Nation, A Framework for Reconstruction and Development*, November 1999, hal. 20.
2. Vienna Declaration and Programme for Action, UN World Conference on Human Rights, Wina, 25 Juni 1993, Dokumen PBB A/CONF.157/23, Pasal 8.
3. Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, "Pernyataan kepada Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia", Dokumen PBB E/1993/22/Annex III, paragraf 5 dan 7, dikutip dalam Henry J. Steiner dan Philip Alston, *International Human Rights In Context: Law, Politics, Morals*, edisi kedua, Oxford University Press, Oxford, New York, 2000, hal. 238.
4. International Committee of the Red Cross (ICRC), Report on the Activities of the Delegation from 1-5 September 1975, laporan internal kepada Markas Besar ICRC di Jenewa, Dili, 1975 (ada dalam arsip CAVR); ICRC, *ICRC Relief Programme in Eastern Timor*, Dili, 24 November 1975, hal. 1.
5. Jon Pedersen dan Marie Arneberg (penyunting), *Social and Economic Conditions in East Timor*, International Conflict Resolution Programme, Columbia University dan Fafo Institute of Applied Social Science, Oslo, 2001, hal. 154-160.
6. João Mariano de Sousa Saldanha, *Ekonomi-Politik Pembangunan TimorTimur*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal. 65, 261.
7. Rui Gomes, *East Timor's Socio-Economic Development under Indonesia (1976-1999)*, London, 2002, hal. 155.
8. Ibid, hal. 150.
9. Ibid, hal.156.
10. *Timor Timur Dalam Angka 1983*, hal. 32; *Timor Timur Dalam Angka 1997*, hal. 57.
11. Gomes, hal. 162.
12. Pedersen dan Arneberg, hal.108.
13. EASD, *Export of Goods from East Timor by Chapter in 2001/2002*, Ministry of Finance, Economic Affairs and Statistics Division, Timor-Leste.
14. Oxfam, *Overview of the Coffee Sector in Timor Leste*, Dili, Januari 2003, tersedia di <www.oxfamgb.org/eastasia/documents/coffeetimor.doc>
15. Kevin Sherlock, *East Timor: Liurais and Chefs de Suco; Indigenous Authorities in 1952*, Darwin, 1983, hal. 15; Shepard Forman, "Descent, Alliance, and Exchange Ideology among the Makassae of East Timor," dalam James Fox (penyunting), *The Flow of Life: Essays on Eastern Indonesia*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1980, hal. 152-177; Jill Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism*, University of Queensland Press, St. Lucia, 1978, hal. 39 dan 41.
16. William Clarence-Smith, "Planters and Smallholders in Portuguese Timor in the Nineteenth and Twentieth Centuries," *Indonesia Circle*, No. 57, Maret 1992, hal. 15-30.
17. David Jenkins, "Sumampouw's Biggest Bet," *Sydney Morning Herald* (Sydney, Australia), 30 Maret 1995.
18. Ibid
19. Ibid
20. Ibid
21. Michael Richardson, "Timor pays for its invasion – in coffee," *The Age* (Melbourne, Australia), 15 Maret 1977, dikutip dalam Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984, hal. 103.

22. Wawancara CAVR dengan Sam Filliaci, Yogyakarta (melalui telepon), 9 Juli 2004.
23. Wawancara CAVR dengan Gilman dos Santos, Christiano Caetano, Dionisio Babo Soares, Sam Filliaci, Arcanjo da Silva, Chung Ki Seng, Norberto Gonçalves, Idelfino, Raimundo Matinsi, Jacob Salsinha Madeira, Mei 2004.
24. Wawancara CAVR dengan Mário Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
25. George Junus Aditjondro, *In the Shadow of Mount Ramelau: The Impact of the Occupation of East Timor*, INDOC, Leiden, 1994.
26. Lihat Richard Robison, *The Rise of Capital*, Allen & Unwin, North Sydney, 1986, hal. 250; Lesley McCulloch, "Tri-fungsi 2000: The Role of the Indonesian Military in Business," Oktober 2000, Bonn International Centre for Conversion.
27. TAPOL, *East Timor under the Indonesian Jackboot*, Occasional Report No. 26, Oktober 1998. Ini juga dibenarkan oleh Lansell Taudevin, mantan pekerja bantuan kemanusiaan Australia dalam Lansell Taudevin, *East Timor: Too Little Too Late*, Duffy and Snellgrove, Sydney, 1999, hal. 77-78.
28. Teofilo Duarte, *Timor: Ante-Camara do Inferno*, Tip Minerva de Gaspar Pinto de Sousa Irmão, Famação, 1930, dikutip dalam Saldanha, hal. 64.
29. Laporan penjarahan kayu cendana oleh TNI pada tahun 1976: CAVR, Profil Masyarakat Desa Costa, Subdistrik Pante Makassar, Distrik Oecussi, 16 Februari 2004. Pernyataan HRVD 0643, 1620 menyebutkan kayu cendana digunakan sebagai tebusan kepada TNI untuk melepas tahanan.
30. *Timor Timur Dalam Angka 1993*, hal. 209.
31. Odd Terje Sandlund et al., *Assessing Environmental Needs and Priorities in East Timor: Final Report*, NINA-NIKU, Foundation for Nature Research and Cultural Heritage Research, Trondheim, 2001, hal. 25.
32. George Bouma dan Halina Kobryn, "Changes in Vegetation Cover in East Timor (1989-1999)," *Natural Resources Forum*, 28 (1), 2004, hal. 1-12.
33. Riwanto Tirtosudarmo, "Demographic engineering, population mobility and social conflict in Indonesia," makalah disampaikan pada lokakarya "The Social-Economic Situation During Economic Crisis in Indonesia", National University, Singapura, 30 Mei-1 Juni 2000. Dikutip dalam Bouma dan Kobryn.
34. Joachim Metzner, *Man and Environment in Eastern Timor*, Australian National University, Canberra, 1977, hal. 248.
35. Gomes, hal. 156.
36. Saldanha, hal. 214.
37. Saldanha, hal. 215.
38. Pedersen dan Arneberg, hal. 69 dan 108.
39. Wawancara CAVR dengan Francisco Soares Pinto, Wakil Kepala Desa Cainliu, Iliomar, Lautém, 1 Juni 2003.
40. Dikutip dalam John G. Taylor, *Indonesia's Forgotten War: the Hidden History of East Timor*, Zed Books, London, 1991, hal. 93.
41. Wawancara CAVR dengan Gilman dos Santos, Dili, 28-29 Juli 2003.
42. Ibid.
43. CAVR, Profil Komunitas Desa Ossohuna, Subdistrik Baguia, Distrik Baucau, 27 Agustus 2003.
44. Metzner, hal. 246.
45. Petunjuk Militer JUKNIS/04-b/IV/1982, "Bagaimana Melindungi Masyarakat dari Pengaruh Propaganda GPK," dokumen militer yang disita nomor 5, dikutip dalam Budiardjo dan Liem, hal. 216.
46. Wawancara CAVR dengan Fernando Amaral, Kepala Desa Fuad, Iliomar, Lautém, 28 Mei 2003; Gaspar Seixas, wakil camat Iliomar 1979-1985, Iliomar, Lautém, 29 Mei 2003; Francisco Soares Pinto, Wakil Kepala Desa Cainliu, Iliomar, Lautém, 1 Juni 2003.
47. Wawancara CAVR dengan Tome da Costa Magalhães, Same, Manufahi, 29 Februari 2003.
48. Wawancara CAVR dengan Fernando Amaral, Kepala Desa Fuad, Iliomar, Lautém, 28 Mei 2003; Gaspar Seixas, wakil camat Iliomar 1979-1985, Iliomar, Lautém, 29 Mei 2003; Francisco Soares Pinto, Wakil Kepala Desa Cainliu, Iliomar, Lautém, 1 Juni 2003.
49. Wawancara CAVR dengan José Gomes, Lalerek Mutin, Viqueque, 14 Desember 2002.

50. Ibid. Lihat juga profil komunitas CAVR untuk Desa Rotuto, Subdistrik Same, Distrik Manufahi; Desa Foholulik, Subdistrik Tilomar, Distrik Covalima, 21 Oktober 2003; Desa Caicase, Subdistrik Fatuberliu, Distrik Manufahi 12 Februari 2003; Desa Bibileo, Subdistrik Viqueque, Distrik Viqueque, 5 Juni 2003; Desa Luca, Subdistrik Viqueque, Distrik Viqueque, 10 Juni 2003; Desa Uma Kik, Subdistrik Viqueque, Distrik Viqueque, 11 Juni 2003.
51. Amnesty International, *East Timor Violations of Human Rights: Extrajudicial Executions, Disappearances, Torture and Political Imprisonment*, Amnesty International Publications, London, 1985, hal. 71.
52. D.J. Richardson, "Visit to East Timor – 23-28 September 1982," laporan disampaikan pada Komite Dengar Pendapat Senat Australia mengenai Timor-Leste, September 1982.
53. Wawancara CAVR dengan Joana Pereira, Dili, 10 Juni 2003; Joana Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, Dili, 28-29 Juli 2003.
54. Profil Komunitas dari Desa Vatuboro, Subdistrik Maubara, Distrik Liquiça, 5 Juni 2003, di mana sekolah dimulai kembali pada tahun 1984; Desa Guguleur, Subdistrik Maubara, Distrik Liquiça, 12 Juni 2003, di mana penduduk diperbolehkan meninggalkan kamp pada tahun 1981 tetapi sekolah tetap belum dimulai sampai 1984; Desa Lukulai, Subdistrik Liquiça, Distrik Liquiça, 19 Februari 2003, di mana sekolah dimulai kembali tahun 1981.
55. Wawancara CAVR dengan Tome da Costa Magalhães, Same, Manufahi, 29 Februari 2003
56. Richardson, 1983.
57. Pedro de Sousa Xavier, *Studi Tentang Hukum Pertanahan Adat Timor Timur di Kecamatan Uato-Carbau, Kabupaten Viqueque*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 1998.
58. "Komisi tidak diperkenankan menangani masalah sengketa tanah, tetapi harus mencatat dan merujuk segala urusan yang berkaitan dengan tanah kepada otoritas UNTAET terkait." Pasal 38.2 Regulasi mandiri Komisi, No. 2001/10.
59. Laura Meitzner Yoder, "Custom dan Conflict: The Uses and Limitations of Traditional Systems in Addressing Rural Land Disputes in East Timor," makalah dipersiapkan untuk lokakarya regional mengenai *Kebijakan Pertanahan dan Administrasi yang Memihak pada Pertumbuhan yang Memihak Rakyat Miskin Pedesaan*, Dili, Desember 2003, hal. 10.
60. Claudia D'Andrea, "The Customary Use and Management of Natural Resources in Timor-Leste," makalah disiapkan untuk lokakarya regional *Land Policy and Administration for Pro-Poor Rural Growth*, Dili, Desember 2003, hal. 17-18; Daniel Fitzpatrick, *Land Claims in East Timor*, Asia-Pacific Press, 2002, hal. 126.
61. Komentar pribadi dari A. Viotti, mantan pejabat hukum UNTAET untuk Manatuto, dikutip oleh Fitzpatrick, hal. 135.
62. Wawancara CAVR dengan Pedro de Sousa Xavier, tanggal tidak tercatat.
63. Saldanha, hal. 218.
64. Yayasan HAK, "The Politics of Agrarian Disputes in East Timor: The Struggle for Land Rights and the Right to Self-Determination," Dili, laporan tidak diterbitkan, tidak bertanggal, dikutip dalam Fitzpatrick, 2002.
65. Ibid.
66. George Aditjondro, *Menyongsong Matahari Terbit di Puncak Ramelau*, Yayasan HAK dan Fortilos, Dili, 2000, hal. 192.
67. Yayasan HAK, hal. 18-19, dikutip dalam Fitzpatrick, hal. 124-125.
68. Fitzpatrick, hal. 119.
69. N. Baisaku, "Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Setelah Berlakunya Undang-undang pokok agraria di Propinsi Timor Timur," tesis tidak diterbitkan, Institut Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 1996, dikutip dalam Fitzpatrick, hal. 96.
70. Joint Assessment Mission, *Report of the Joint Assessment Mission to East Timor*, World Bank, 8 Desember 1999, hal.1-19.
71. Joint Assessment Mission, *Health and Education Background Paper*, 1999, hal. 1.
72. Ibid, hal. 7.
73. KORPRI, *20 Tahun Timor Timur Membangun*, Dili, 1996, hal. 93.
74. KIHESB Komentar Umum 14, (komentar mengenai persoalan substantif yang timbul dalam KIHESB) paragraf 8.
75. Komite untuk Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 10 (h), 16 (1)e.

76. KIHESB Komentar Umum 14, paragraf 43.
77. Pasal 2, Kovenan Internasional tentang Hak, Ekonomi, Sosial dan Budaya, buka untuk tandatangan 16 Desember 1966, mulai berlaku 3 Januari 1976.
78. Wawancara CAVR dengan Sue Ingram, Dili, 5 Agustus 2004.
79. Whitehall, 1975.
80. Joint Assessment Mission to East Timor 1999, hal. 11.
81. UNDP 2001, dikutip dalam Gomes, hal. 200.
82. Pedersen dan Arneberg, hal. 61-62.
83. World Bank Poverty Assessment Survey, hal. 5.
84. UN Country Team, 2000, hal. 52.
85. Meharben Singh, "The Role of Micronutrients for Physical and Mental Development," *Indian Journal of Pediatrics*, Vol. 71 (1), 2004, hal. 59-62; Ernesto Pollitt dan C. Thomson, "Protein-calorie malnutrition and behavior: A view from psychology," dalam Richard Wurtman dan Judith Wurtman (penyunting) *Nutrition and the Brain*, jilid 2, Raven, New York, 1977; Derrick Jelliffe, "Effect of Malnutrition on Behavioral and Social Development," dalam *Proceedings of the Western Hemisphere Nutrition Congress*, American Medical Association, Chicago, 1965.
86. World Bank, *Poverty in a New Nation: Analysis for Action*, Dili, 2003, jilid 2, hal. 144-145.
87. Pedersen dan Arneberg, hal. 70.
88. *Ibid*, hal. 71.
89. *Ibid*.
90. Donor Joint Assessment Mission, *Health and Education Background Paper*, November 1999.
91. Saldanha, hal. 50.
92. *Ibid*, hal. 47.
93. *Ibid*, hal. 43.
94. Pedersen dan Arneberg, hal. 80.
95. *Ibid*, hal. 80.
96. Lokakarya kesehatan CAVR, 30 Agustus 2004
97. Pedersen dan Arneberg, hal. 63.
98. Karen Campbell-Nelson, Yooke Adelina Damapolii, Leonard Simanjuntak, dan Ferderika Tadu Huntu, *Perempuan dibawah Laki-laki yang Kalah: Kekerasan terhadap Perempuan Timor Timur dalam Kamp Pengungsian Di Timor Barat*, JKPI dan PIKUL, Kupang, 2001, halaman 54.
99. *Ibid*, p.71.
100. Wawancara CAVR dengan Natália Dos Santos, Liquiça, 28 Maret 2003; wawancara CAVR dengan Maria Da Costa Silva, Same, 26 Februari 2003; dan wawancara CAVR dengan Raimunda da Conceição Mendonça da Costa, Oecussi, 1 April 2003.
101. World Bank, *Indonesia: Family Planning Perspectives in the 1990s*, Laporan No. 7760-IND, Country Department V, Asian Regional Office, 30 January 1990, 'Definitions'.
102. John Fernandes, kesaksian ahli yang diberi ke CAVR, Audiensi Publik Nasional mengenai Perempuan dan Konflik, 28-19 April 2003.
103. *Ibid*.
104. Wawancara CAVR dengan Natalia dos Santos, Liquiça, 28 Maret 2003.
105. *Rekaman Peristiwa*, Juli 1996, hal. 8.
106. Wawancara CAVR dengan Lucia Maria Pereira, Same, 27 Februari 2003.
107. Aditjondro, 2000, hal. 110; Budiardjo dan Liem, hal. 116; Sarah Storey, "Coercive Birth Control and Settler Infusion: The Indonesian prophylactic against East Timorese self-determination," *East Timor Update - Supplement*, 1996.
108. Wawancara CAVR dengan Isabel Galhos, Dili, 22 April 2003.
109. *Ibid*.
110. Wawancara CAVR dengan Carlito das Regras, Same, Manufahi, 27 Februari 2003.
111. Wawancara CAVR dengan Senorinha Mendonça, Maubisse, Ainaro, 8 September 2004.
112. Miranda Sissons, *From One Day to Another: Violations of Women's Reproductive and Sexual Rights in East Timor*, East Timor Human Rights Centre, Melbourne, 1997, hal. 21.

113. Paola Totaro, "Country on a Couch," *Sydney Morning Herald* (Sydney, Australia) 24 Juni 2000, hal. 30.
114. J. Modvig, J. Pagaduan-Lopez, J. Rodenburg, C. M. D. Salud, R. V. Cabigon, C. I. A. Pabelo, "Torture and Trauma in Post-Conflict East Timor," *Lancet*, November 2000, hal. 356.
115. Derrick Silove, K. Tang, M. Chaussivert, dan M. Soares. "Trauma Recovery and Community Mental Health" dan J.S. Martins dan R. M. de Araújo. "Strategic Health Development Planning for East Timor"; keduanya adalah makalah yang tidak diterbitkan yang disampaikan pada *Strategic Development Planning for East Timor Conference* [Konferensi Perencanaan Pembangunan Strategis untuk Timor-Leste], Melbourne, 5-9 April 1999. Pedersen dan Arneberg, hal. 74.
116. Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum 13, paragraf 1.
117. *Ibid* paragraf 6 (a).
118. *Ibid*, paragraf 6 (b).
119. *Ibid*, paragraf 6 (c).
120. *Ibid*, paragraf 6 (d).
121. KIHESB, Pasal 13 (1).
122. Saldanha, hal. 57, Pedersen dan Arneberg, hal. 84.
123. Pedersen dan Arneberg, hal. 85.
124. Saldanha, hal. 58.
125. *Ibid*, hal. 60.
126. SUSENAS 1998.
127. Pedersen dan Arneberg, hal. 91.
128. Pedersen dan Arneberg, hal. 86.
129. World Bank, Poverty Assessment Survey, jilid 1, hal. 131.
130. Gomes, hal. 200.
131. Oxfam, *East Timor Human Resource Development Programme Report*, Oxfam, London, 1999, hal. 26, dikutip dalam Pedersen dan Arneberg, hal. 92.
132. Pedersen dan Arneberg, hal. 92.
133. *Ibid*, hal. 92-93.
134. Timor Aid, *Problems with Indonesian Schooling in East Timor: Why East Timorese students do not succeed*, 1999, ada di: <timoraid.org/v1/timortoday/background/background_0001.htm>.
135. Pedersen dan Arneberg, *Social dan Economic Conditions*, hal. 90.
136. Peter Carey, "Third-World Colonialism, the Geração Foun, and the Birth of a New Nation: Indonesia through East Timorese Eyes, 1975-99," *Indonesia*, Vol. 76, Oktober 2003, hal. 23-67.
137. KORPRI 1996, dikutip dalam Gomes, hal. 206.
138. Laporan Komando KOMTARRES 15.3 Timor Timur Dalam Rangka Kunjungan KAPOLRI Beserta Rombongan ke Daerah Operasi Timor Timur, Juni 1978, Dili, Daerah Pertahanan Keamanan, Komando Antar Resort Kepolisian 15.3. Lihat juga KORPRI Timor Timur 1996, hal. 145.
139. Laporan militer rahasia, Komando Pelaksana Operasi Timor Timur, Dili (8452), Laporan B (Intelijen) Rencana Operasi No. 1/Bayu. 261500/1984, hal. 4. Lihat juga wawancara CAVR dengan Zacarias Mendonça, mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri Maubisse, Maubisse, Ainaro, Oktober 2004.
140. KORPRI Timor Timur 1996, hal. 139.
141. Susenas 1998.
142. KORPRI Timor Timur, hal.145.
143. *Ibid*, hal. 243.
144. Fernando de Araújo, *Pernyataan Pembelaan*, 11 Mei 1992.

Chega! merupakan sebuah kesaksian yang meresahkan. Laporan ini akan menyentak para pembaca Indonesia yang mengira bahwa di bawah rezim Soeharto semuanya berjalan damai di provinsi Indonesia ke-27 saat itu. Halaman demi halaman kita dapat membaca cerita-cerita korban pembantaian, perkosaan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan berbagai kejahatan yang tidak terbayangkan. ...[M]asyarakat di Indonesia dapat belajar dari ***Chega!*** Berkat penerbitan laporan ini oleh KPG, pembelajaran tersebut menjadi dimungkinkan. Laporan ini adalah suatu kontribusi penting ke arah demokratisasi di Indonesia dan reformasi sektor keamanannya..

Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM

Laporan CAVR adalah ensiklopedi sejarah kita, yang kaya baik dalam hal ajaran juga penderitaan. Kita harus memanfaatkan ajarannya yang luar biasa untuk... mencegah krisis di masa depan.

Jose Ramos-Horta,
Penerima Anugerah Nobel Perdamaian, Presiden Timor-Leste

Sosialisasi ***Chega!*** penting sekali bagi rakyat Timor-Leste maupun Indonesia agar rakyat kedua belah pihak tahu apa yang sesungguhnya terjadi.

Ade Rostina Sitompul,
pejuang Hak Asasi Manusia

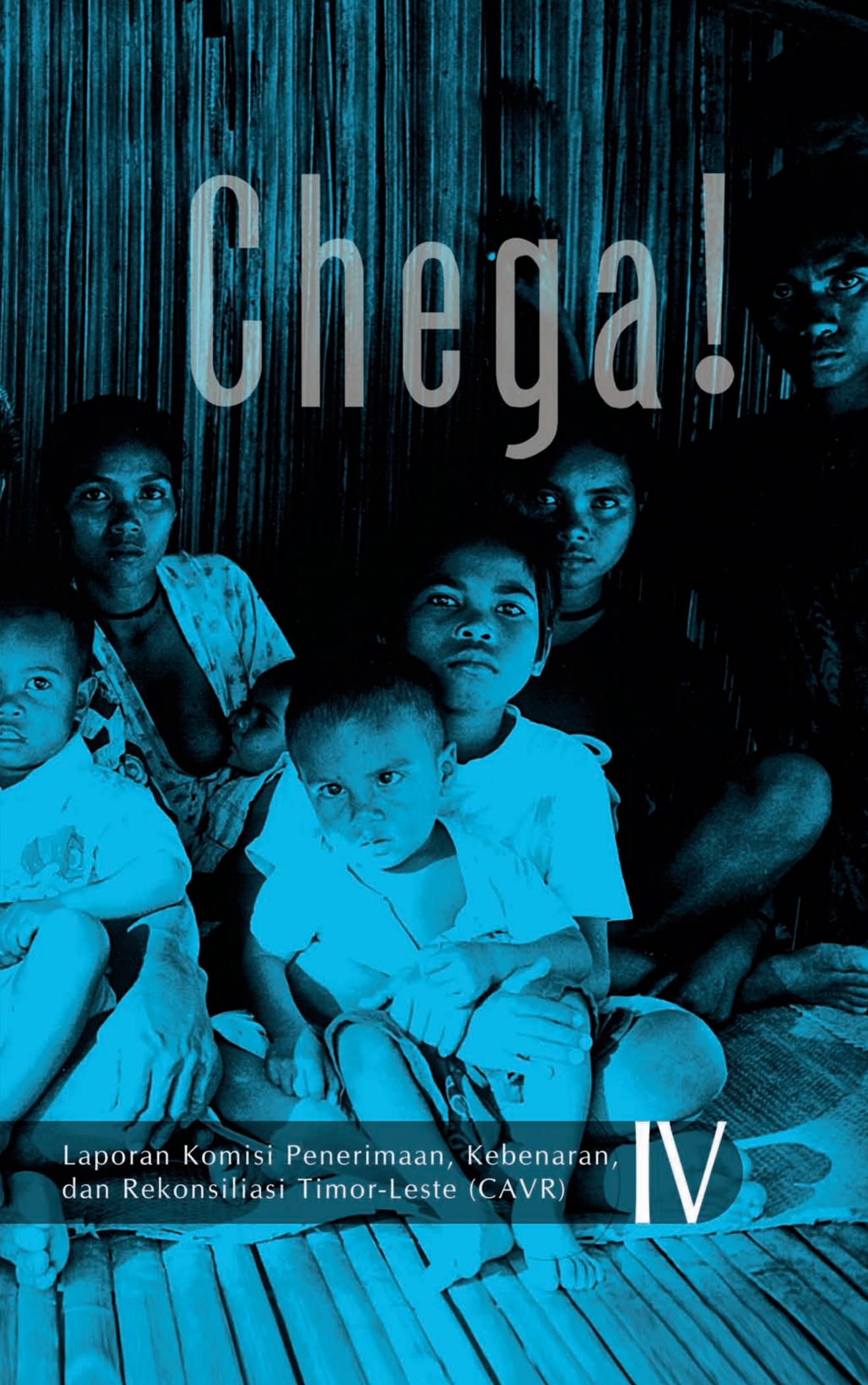
Laporan CAVR menandakan sebuah titik tonggak... Harapan tulus saya adalah agar (laporan) ini menjadi kontribusi tanpa henti untuk membangun bangsa Timor dan akan mencegah berulangnya peristiwa tragis di Timor-Leste dan tempat lain.

Kofi Annan,
mantan Sekretaris Jenderal PBB

KPG (KEPUSTAKAAN POPULER GRAMEDIA)
Gedung Kompas Gramedia, Blok 1 Lt. 3
Jl. Palmerah Barat 29 - 37, Jakarta 10270
Telp. 021-5365 0110, 5365 0111 ext. 3362-3364
Fax. 021-5369 8044



Chega!



Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR)

IV

Chega!

V o l u m e I V

TERBITAN CAVR LAINNYA:

Buku-buku Audiensi Publik:

Penahanan politik
Perempuan dan konflik
Pemindahan paksa dan kelaparan
Pembantaian
Konflik politik internal 1974 – 1976
Penentuan nasib sendiri dan masyarakat internasional
Anak dan konflik

Buku-buku lain:

Rona Ami-Nia Lian (Dengarkan suara kami)
Penjara Comarca Balide: Sebuah 'Gedung Sakral'
Laporan Eksekutif Chega!

Video dan radio dokumenter:

Dalan ba Dame (Jalan Menuju Perdamaian)



<http://www.cavr-timorleste.org>
info@cavr-timorleste.org

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

V o l u m e I V

JAKARTA
KPG

Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

V o l u m e I V

KPG: 950 04 10 0341

Cetakan pertama, Agustus 2010

Penyusun:

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

Foto sampul:

Poriaman Sitanggang

Pembaca akhir:

Rani Elsanti

Desain dan tata letak:

M. Roniyadi

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

**Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di
Timor-Leste - Volume IV**

Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2010

xii + 410 hlm; 150x230 mm

ISBN-13: 978-979-91-0247-8

Penerbitan buku ini didanai oleh Pemerintah Irlandia dan Jerman

Dicetak oleh PT Gramedia, Jakarta.

Isi di luar tanggungjawab percetakan.

2511 | **Bagian 8: Tanggung jawab dan pertanggungjawaban**

2519 | **Pendahuluan**

- 2519** | Tanggung jawab negara, lembaga, dan pribadi
- 2523** | Pembunuhan yang sah dan penahanan.
- 2523** | Fokus pada tanggung jawab institusional

2524 | **Temuan utama**

- 2524** | Negara Indonesia dan Pasukan Keamanan Indonesia

2532 | **Metodologi untuk mengidentifikasi tanggung jawab lembaga**

2537 | **Tanggung jawab dan pertanggungjawaban pasukan keamanan Indonesia**

- 2537** | Bukti yang mendasari segmen ini
- 2538** | Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia.
- 2580** | Tanggung jawab pribadi atas pelanggaran berskala luas dan sistematis
- 2580** | Pertanggungjawaban tingkat tinggi

2596 | **Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai politik Timor**

- 2599** | Tanggung jawab dan pertanggungjawaban Fretilin/Falintil
- 2613** | Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai politik UDT
- 2620** | Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai Apodeti
- 2621** | Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai Tralabhistas dan KOTA

2622 | **Tanggung jawab negara**

- 2622** | Tanggung jawab Negara Indonesia
- 2625** | Tanggung jawab Negara Portugal
- 2627** | Tanggung jawab Negara Australia
- 2629** | Tanggung jawab Amerika Serikat
- 2630** | Tanggung jawab PBB

2632 | **Lampiran 1: Tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan, 1999**

- 2632** | Pendahuluan
- 2636** | Tanggung jawab TNI atas pelanggaran
- 2636** | Anggota TNI sebagai pelaku pelanggaran

- 2638 | Tanggung jawab TNI atas tindakan kelompok milisi
- 2650 | Pengetahuan, ancaman, dan peringatan TNI sebelum kekerasan massal September 1999
- 2651 | Tidak bertindaknya TNI untuk menghukum pelaku/penghargaan lembaga kepada mereka yang terlibat
- 2652 | Peran anggota polisi Indonesia
- 2653 | Kerja sama dan partisipasi pejabat pemerintah Indonesia di tingkat lokal maupun pusat

- 2656 | Temuan dan kesimpulan
- 2657 | Kesimpulan

- 2658 | Lampiran 2: Tanggung jawab komando
- 2681 | Lampiran 3: Perorangan dengan komando tingkat tinggi
- 2687 | Lampiran 4: Karier para perwira Indonesia yang bertugas di Timor-Leste

2695 | Bagian 9: Rekonsiliasi komunitas

- 2701 | Pendahuluan
 - 2701 | Ulasan bab
 - 2703 | Latar belakang
 - 2709 | Asal-usul Proses Rekonsiliasi Komunitas

- 2711 | Proses Rekonsiliasi Komunitas
 - 2712 | Tujuan Proses Rekonsiliasi Komunitas
 - 2713 | Kerangka prosedural
 - 2717 | Pengendalian PRK pada *lisan* (adat) dan hukum

- 2718 | Pelaksanaan Program PRK
 - 2718 | Staf
 - 2718 | Jadwal
 - 2719 | Tantangan awal
 - 2720 | Keterlibatan masyarakat
 - 2721 | Pertemuan PRK
 - 2729 | Peranan *lisan* (adat) dalam Pertemuan PRK

- 2736 | Hasil Program PRK
 - 2736 | Hasil umum
 - 2740 | Jumlah deponen dalam pertemuan PRK
 - 2740 | Tindakan yang ditangani PRK
 - 2740 | Tindakan Rekonsiliasi

- 2742 | Efektivitas Program PRK
 - 2743 | Mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam komunitasnya
 - 2744 | Memulihkan martabat korban
 - 2745 | Menetapkan kebenaran tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia
 - 2744 | Mempromosikan Rekonsiliasi
 - 2749 | Pelajaran yang diperoleh

- 2751 | Dampak lebih luas Program PRK
 - 2751 | PRK sebagai simbol berakhirnya konflik
 - 2752 | Sumbangan untuk upaya memberantas impunitas
 - 2754 | Sumbangan PRK untuk penguatan kapasitas
 - 2755 | PRK: Pendekatan keadilan yang unik

- 2758 | Refleksi
 - 2758 | Kesimpulan
 - 2759 | Pekerjaan yang tersisa
 - 2761 | Masa depan PRK

2765 | Bagian 10: *Acolhimento* dan Dukungan pada Korban

- 2771 | Pendahuluan
 - 2772 | Struktur Unit
 - 2773 | Interpretasi

- 2777 | Penerimaan dan Penjangkauan
 - 2777 | Latar Belakang
 - 2779 | Monitoring terhadap orang-orang yang baru kembali
 - 2783 | Menjangkau Timor Barat

- 2792 | Pemulihan martabat para korban
 - 2792 | Pendahuluan
 - 2794 | Audiensi Publik
 - 2808 | Lokakarya Pemulihan
 - 2821 | Reparasi Mendesak
 - 2830 | Profil Komunitas
 - 2847 | Pelajaran yang dapat dipetik

2855 | Bagian 11: Rekomendasi

- 2861 | Pendahuluan

2864 | Rekomendasi-rekomendasi

- 2864** | Timor-Leste dan masyarakat internasional
- 2866** | Timor-Leste dan Portugal
- 2867** | Hak asasi manusia Timor-Leste: memajukan dan melindungi semua hak bagi setiap orang
- 2875** | Hak asasi manusia di rumah: memajukan dan melindungi hak mereka yang rentan
- 2879** | Hak asasi manusia di Timor-Leste: memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia melalui lembaga-lembaga yang efektif
- 2886** | Hak asasi manusia di Timor-Leste: pelayanan keamanan yang melindungi dan memajukan hak asasi manusia
- 2890** | Keadilan dan kebenaran
- 2898** | Rekonsiliasi
- 2900** | Rekonsiliasi dalam kalangan politik Timor-Leste
- 2902** | Rekonsiliasi dengan Indonesia
- 2905** | *Acolhimento* (Penerimaan)
- 2906** | Reparasi
- 2919** | Lembaga penerus CAVR

Daftar tabel:

- 2534** | Tanggung jawab pelaku atas pelanggaran yang dilaporkan ke CAVR: 1974-1999
- 2535** | Perincian tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia atas pelanggaran yang dilaporkan kepada CAVR: 1974-1999
- 2538** | Semua pelanggaran yang dilaporkan, 1974-1999
- 2538** | Kasus pembunuhan di luar hukum yang dilaporkan, 1974-1999
- 2539** | Perincian kelompok pelaku: Pembunuhan di luar hukum, 1974-1999
- 2539** | Penghilangan paksa, 1974-1999
- 2539** | Perincian kelompok pelaku: Penghilangan paksa, 1974-1999
- 2549** | Penahanan, 1974-1999
- 2549** | Perincian kelompok pelaku: Penahanan, 1974-1999
- 2549** | Penyiksaan dan penganiayaan, 1974-1999
- 2550** | Perincian kelompok pelaku: Penyiksaan dan penganiayaan, 1974-1999
- 2555** | Pelanggaran seksual, 1974-1999
- 2556** | Perincian kelompok pelaku: Pelanggaran seksual, 1974-1999
- 2600** | Tanggung jawab Fretilin/Falintil atas pembunuhan tidak sah dan penghilangan paksa (kasus yang dilaporkan kepada CAVR)
- 2633** | Pelanggaran oleh kelompok pelaku utama yang dilaporkan, 1999
- 2634** | Perincian tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia, menurut pelanggaran yang dilaporkan, 1999
- 2718** | Jadwal kegiatan PRK dalam periode operasional tiga bulan di setiap subdistrik
- 2737** | Hasil program PRK menurut distrik
- 2779** | Desa-desa yang dikunjungi oleh staf Komisi untuk bertemu dengan pengungsi yang kembali
- 2786** | Pembagian berdasarkan Wilayah Diskusi Kelompok Sasaran/Pertemuan Komunitas
- 2787** | Perincian Pengambilan Pernyataan berdasarkan Kabupaten
- 2658** | Tanggung jawab komando terhadap keterlibatan institusi dalam pelanggaran hak asasi manusia, Timor-Leste 1974 – 1999
- 2660** | Para komandan Kodam XVI/Udayana (1974 - 79)/Kodim IX Udayana
- 2661** | Komandan Korem yang diketahui
- 2663** | Perincian pelanggaran Kodim menurut jenis pelanggaran
- 2663** | Komandan Kodim 1627 Dili yang diketahui
- 2664** | Para komandan Kodim 1631 Manatuto yang diketahui
- 2665** | Para komandan Kodim 1632 Aileu yang diketahui
- 2665** | Komandan Kodim 1633 Ainaro yang diketahui
- 2666** | Komandan Kodim 1634 Manufahi yang diketahui
- 2667** | Komandan Kodim 1637 Ermera yang diketahui
- 2668** | Komandan Kodim 1638 Liquiçá yang diketahui
- 2669** | Komandan Batalion 744 yang diketahui

- 2670** | Komandan Batalion 745 yang diketahui
- 2672** | Komandan Batalion Infanteri 315 yang diketahui
- 2672** | Komandan Batalion Infanteri 321 yang diketahui
- 2672** | Komandan Batalion Infanteri 403 yang diketahui
- 2673** | Komandan Batalion Infanteri 512 yang diketahui
- 2675** | Komandan Kopassus/Unit Nanggala yang diketahui
- 2677** | Komandan Rajawali yang diketahui
- 2678** | Komandan Polres yang diketahui

Daftar diagram:

- 2738** | Hasil PRK
- 2838** | Peta sketsa Iliomar I
- 2839** | Peta sketsa Pairara
- 2839** | Peta sketsa Beco 2/Tasilin 1977
- 2840** | Peta sketsa Beco 2/Tasilin 1999
- 2840** | Peta sketsa Guda
- 2841** | Peta sketsa Osso-Huna
- 2841** | Peta sketsa Uaitame
- 2842** | Peta sketsa Caimauk
- 2842** | Peta sketsa Ura-Hoci
- 2843** | Peta sketsa Mahaklusin
- 2844** | Peta sketsa Rasa
- 2845** | Peta sketsa Miligu
- 2845** | Peta sketsa Taiboco
- 2846** | Peta sketsa Beidasi





Chega!

Bagian 10.

Acolhimento
dan Dukungan pada Korban

Bagian 10. *Acolhimento* dan Dukungan pada Korban

2771 | Pendahuluan

2772 | Struktur Unit

2773 | Interpretasi

2773 | *Acolhimento*

2774 | Korban

2774 | **Boks: *Acolhimento***

2777 | Penerimaan dan penjangkauan

2777 | Latar Belakang

2779 | Pemantauan terhadap orang-orang yang baru kembali

2781 | Hal-hal yang ditemukan oleh Komisi

2782 | **Boks: Mendampingi pengungsi pulang**

2783 | Kesan-kesan dari Program Monitoring

2783 | Menjangkau Timor Barat

2783 | Program menjangkau Timor Barat

2784 | Pelaksanaan program

2785 | Sosialisasi kepada komunitas pengungsi mengenai Komisi

2787 | Pengambilan pernyataan

2788 | Tanggapan pengungsi

2789 | **Ketakutan**

2790 | **Pengucilan sosial**

2790 | **Pertimbangan ekonomi**

2790 | **Ras**

2791 | **Isu-isu politik**

2791 | Pengungsi perempuan dan rekonsiliasi

2792 | Refleksi tentang program

2792 | Pemulihan martabat para korban

2792 | Pendahuluan

2793 | Audiensi Publik

2793 | Lokakarya Pemulihan

2794 | Reparasi Mendesak

2794 | Profil Komunitas

2794 | Audiensi Publik

2795 | Tujuan Audiensi Publik

2796 | Para korban yang dipilih untuk bersaksi

- 2797 | Boks: Dari desa terpencil ke audiensi publik
- 2798 | Audiensi publik nasional
- 2798 | Boks: Dengarlah Suara Kami - *Rona Ami-nia Lian*
- 2800 | Audiensi nasional tematis
- 2801 | Hal-hal penting dari audiensi nasional
- 2803 | Boks: Pidato pembukaan Uskup Basilio do Nascimento pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-1976
- 2803 | Audiensi korban subdistrik
- 2804 | Boks: Audiensi Subdistrik: Natarbora
- 2805 | Dampak keikutsertaan terhadap korban
- 2808 | Dampak dari audiensi publik
- 2808 | Lokakarya Pemulihan
 - 2808 | Latar belakang
 - 2809 | Maksud dan tujuan
 - 2810 | Boks: Lokakarya Pemulihan: bantuan yang lebih mendalam
 - 2811 | Peserta
 - 2812 | Program lokakarya
 - 2813 | **Hari pertama**
 - 2813 | Boks: Perjalanan pemulihan
 - 2815 | Boks: Kesempatan membangun kesepahaman
 - 2816 | **Hari kedua**
 - 2816 | **Hari ketiga**
 - 2817 | Boks: Tarian orang-orang yang terluka
 - 2818 | Boks: Dukungan sesama korban
 - 2819 | Refleksi tentang lokakarya pemulihan
 - 2820 | Boks: Pokok-pokok program menurut pandangan peserta
- 2821 | Reparasi Mendesak
 - 2821 | Latar belakang
 - 2821 | Alasan adanya skema reparasi
 - 2822 | Pendanaan
 - 2822 | Maksud dan tujuan program
 - 2823 | Siapa yang berhak menerima bantuan
 - 2823 | Bentuk-bentuk reparasi
 - 2824 | Penerapan skema
 - 2825 | Hasil - bantuan yang diberikan

- 2825 | Boks: David Rodriguez, penerima kaki buatan
- 2826 | Boks: Carminda dos Santos, rumah milik sendiri
- 2827 | Penggunaan dana bantuan
- 2828 | Boks: Penggunaan dana bantuan Reparasi Mendesak
- 2829 | Boks: Tanggapan anggota komunitas
- 2829 | Tinjauan terhadap Skema Reparasi Mendesak
- 2830 | Profil Komunitas
 - 2830 | Latar belakang
 - 2832 | Proses seleksi
 - 2832 | Boks: Diskusi komunitas meredakan ketegangan sejarah
 - 2835 | Partisipasi
 - 2836 | Metode Profil Komunitas
 - 2837 | Peta Sketsa
 - 2847 | Dampak
- 2847 | Pelajaran yang dapat dipetik
 - 2847 | Penerimaan (*Acolhimento*), orang-orang yang kembali dan Timor Barat
 - 2849 | Reparasi-reparasi mendesak
 - 2849 | Para korban
 - 2850 | *Survivor* pemerkosaan
 - 2851 | Pemuda, terutama yang di daerah perkotaan
 - 2852 | Laki-laki cacat tengah-baya
 - 2852 | Eks-tahanan politik dan korban siksaan
 - 2852 | Korban dan keluarga korban kekerasan Fretilin/Falintil
 - 2852 | Masa depan

Daftar tabel:

- 2779 | **Tabel 1** : Desa-desa yang dikunjungi oleh staf Komisi untuk bertemu dengan pengungsi yang kembali
- 2786 | **Tabel 2** : Pembagian berdasarkan Wilayah Diskusi Kelompok Sasaran/Pertemuan Komunitas
- 2787 | **Tabel 3** : Perincian Pengambilan Pernyataan berdasarkan Kabupaten

Daftar diagram:

- 2838** | **Diagram 1:** Peta sketsa Iliomar I
- 2839** | **Diagram 2:** Peta sketsa Pairara
- 2839** | **Diagram 3:** Peta sketsa Beco 2/Tasilin 1977
- 2840** | **Diagram 4:** Peta sketsa Beco 2/Tasilin 1999
- 2840** | **Diagram 5:** Peta sketsa Guda
- 2841** | **Diagram 6:** Peta sketsa Osso-Huna
- 2841** | **Diagram 7:** Peta sketsa Uaitame
- 2842** | **Diagram 8:** Peta sketsa Caimauk
- 2842** | **Diagram 9:** Peta sketsa Ura-Hoci
- 2843** | **Diagram 10:** Peta sketsa Mahaklusin
- 2844** | **Diagram 11:** Peta sketsa Rasa
- 2845** | **Diagram 12:** Peta sketsa Miligu
- 2845** | **Diagram 13:** Peta sketsa Taiboco
- 2846** | **Diagram 14:** Peta sketsa Beidasi

10

Acolhimento dan Dukungan pada Korban

Pendahuluan

1. Bab ini berupa laporan tentang program-program divisi *Acolhimento* dan Dukungan pada Korban yang dijalankan oleh Komisi ini. Sesuai dengan namanya, divisi ini bekerja untuk memenuhi dua fungsi Komisi yang utama, namun cukup berbeda satu sama lain. Kedua fungsi ini melintasi semua aspek mandat Komisi, dalam arti bahwa prinsip-prinsip *acolhimento* dan dukungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia menjadi titik tolak bagi rancangan seluruh program Komisi.

2. Arti penting '*acolhimento*' bagi pekerjaan Komisi tecermin pada penggunaan kata '*acolhimento*' sebagai prinsip pertama dari tiga pedoman utama yang disebut dalam nama *Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste*. Tidak seperti kebenaran dan rekonsiliasi, *acolhimento* tidak secara langsung disebutkan dalam Regulasi 10/2001, karena *acolhimento* lebih daripada sekadar suatu fungsi langsung atau tujuan yang dapat terukur belaka, melainkan juga spirit yang mendasari segala aspek pekerjaan Komisi. Istilah ini menunjukkan pengakuan tentang pentingnya bagi orang Timor untuk saling menerima setelah perpecahan dan konflik bertahun-tahun. Secara khusus, *acolhimento* merupakan tanggapan terhadap situasi orang-orang yang pergi ke Timor Barat pada 1999—baik mereka yang kembali ke Timor-Leste maupun mereka yang tetap tinggal di kamp-kamp dan permukiman di Timor Barat. Dua program spesifik dikembangkan sebagai tanggapan terhadap situasi yang demikian itu:

- Program pemantauan dan informasi untuk orang-orang yang baru kembali
- Program penjangkauan, yang dilaksanakan dalam kerjasama dengan organisasi-organisasi nonpemerintah di Timor Barat, bagi pengungsi-pengungsi yang masih berada di seberang perbatasan

3. Berbeda dengan *acolhimento*, 'dukungan pada korban' adalah sebuah tujuan spesifik Komisi yang tercantum dalam Regulasi 10/2001. Pasal 3 Regulasi menyebutkan

bahwa Komisi ini dimaksud untuk: “membantu memulihkan martabat korban-korban pelanggaran hak asasi manusia.” Namun, Regulasi ini tidak menetapkan bagaimana Komisi seharusnya berjalan untuk mencapai tujuannya itu.

4. Seperti *acolhimento*, prinsip mendukung korban pelanggaran hak asasi manusia ini mendasari cara Komisi dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang lain, yakni kebenaran, rekonsiliasi, dan penulisan Laporan Akhir. Membantu orang-orang dan komunitas-komunitas yang selama ini menderita untuk pulih kembali, serta memulihkan harga diri mereka, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk memperbaiki hubungan yang rusak selama berlangsungnya konflik dan untuk membangun rekonsiliasi yang langgeng. Komisi ini dimaksudkan untuk menjadi corong bagi suara korban, yang telah begitu lama tidak dapat mengungkapkan penderitaan yang telah mereka alami, serta untuk memberikan sumbangan praktis bagi proses pemulihan mereka.

5. Divisi *Acolhimento* dan Dukungan pada Korban juga melaksanakan serangkaian program spesifik. Program-program ini meliputi:

- Audiensi publik, baik di tingkat nasional maupun subdistrik
- Serangkaian Lokakarya Pemulihan di kantor nasional Komisi
- Sebuah skema Reparasi Mendesak untuk para korban dengan kebutuhan mendesak
- Lokakarya partisipatoris di desa-desa, untuk mendiskusikan dampak konflik terhadap komunitas-komunitas (ini disebut ‘Profil Komunitas’)

Struktur unit

6. Divisi *Acolhimento* dan Dukungan pada Korban berpusat di Dili. Kantor nasional Komisi mengkoordinasikan semua program *Acolhimento*. Meski para Komisaris Regional terkadang turut serta dalam kunjungan ke desa-desa yang memiliki penduduk yang baru kembali, atau mengunjungi kamp-kamp di Timor Barat, sebagian besar pekerjaan dikelola dari kantor nasional.

7. Akan tetapi, kerja dukungan bagi korban mengandalkan staf di distrik-distrik untuk melaksanakan program di tingkat distrik. Ini menjadi hal dasar dalam pekerjaan dukungan bagi korban, agar dapat menjangkau semua komunitas di Timor-Leste. Hal ini semakin penting di daerah-daerah perdesaan Timor-Leste, di mana banyak terdapat komunitas yang terisolasi, dan di mana orang-orang yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia semasa konflik mungkin kini merasa dilupakan oleh mereka yang berada di tingkat nasional. Tim distrik terdiri atas orang-orang yang berasal dari daerah setempat, dan dua anggota dari tim ini, satu laki-laki dan satu perempuan, adalah petugas penjangkauan dan dukungan bagi distrik.

8. Struktur dan tanggung jawab Unit *Acolhimento* dan Dukungan pada Korban diuraikan secara terperinci dalam Bagian 1: Pendahuluan.

Interpretasi

Acolhimento

9. Para Komisaris Nasional tidak berusaha mereduksi konsep ‘*acolhimento*’ ke dalam suatu definisi tunggal. *Acolhimento* ini merupakan baik bagian dari semangat pendekatan Komisi dalam melaksanakan pekerjaannya, maupun juga semangat yang Komisi harapkan bisa ditumbuhkan dengan subur di masyarakat. *Acolhimento* melibatkan orang untuk saling menerima sebagai warga Timor-Leste, kembali pada diri, hidup bersama di bawah satu atap, setelah bertahun-tahun perpecahan dan kekerasan.

10. Hal ini berkaitan langsung dengan saudara-saudara kita orang Timor yang masih berada di Indonesia setelah eksodus 1999, dan dengan mereka yang melarikan diri pada 1975 atau setelahnya, yang hidup dalam pengasingan di negara-negara lain di seluruh dunia. Tetapi ini juga berkaitan dengan kita semua, baik kita yang meninggalkan Timor-Leste atau yang tetap berada di sini. Konflik selama dua puluh empat tahun telah menceraiberaikan bangsa Timor ke seluruh dunia, memecahkan keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas, serta menciptakan keterpecahan, bahkan di dalam diri seseorang. *Acolhimento* mewakili suatu semangat penerimaan dengan penuh rasa hormat terhadap satu sama lain dan diri kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan terhadap satu sama lain. *Acolhimento* merupakan prasyarat agar bisa memiliki keberanian untuk berbicara, dan untuk mendengar kebenaran dan mengupayakan rekonsiliasi.

11. *Acolhimento* tumbuh dari suatu pemuliaan serta penghargaan yang mendalam terhadap warisan budaya kita yang kaya. Warisan ini meliputi baik kebudayaan tradisional yang selama bertahun-tahun telah dikekang, maupun pengalaman-pengalaman kita tentang kolonialisme, perang, dan pendudukan. *Acolhimento* merupakan cara untuk membantu diri masing-masing dalam menerima keragaman dimensi arti menjadi orang Timor, hidup bersama apa yang telah kita alami, dan menciptakan masyarakat yang meliputi kita semua, bahkan orang-orang yang telah melakukan kesalahan di masa lalu sekalipun. Dalam hubungan ini, kisah Alkitab tentang anak yang hilang merupakan kisah perumpamaan yang menunjukkan semangat *acolhimento*.

12. Sementara nama Komisi ini dalam bahasa Inggris disebut Commission for Reception, Truth and Reconciliation (Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi), Komisi beranggapan bahwa kata ‘*reception*’ (‘penerimaan’) tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang kita maksud dengan kata ‘*acolhimento*’, sehingga kata ‘*acolhimento*’ akan terus digunakan di sepanjang bab ini.

Korban*

13. Regulasi 10/2001 mendefinisikan 'korban' sebagai:

“orang yang secara individu atau bersama telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran haknya secara substansial akibat perbuatan yang termasuk dalam yurisdiksi Komisi untuk dipertimbangkan, dan termasuk sanak-saudara atau orang-orang yang hidup bergantung pada korban yang mengalami penderitaan/kerugian itu.” [Pasal 1]

14. Komisi mengakui semua korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak yang berkonflik. Ini termasuk warga sipil Timor yang menderita di tangan partai politik Timor-Leste dalam konflik sipil 1975, orang Timor yang menderita akibat pelanggaran yang dilakukan oleh militer Indonesia serta orang-orang sipil yang membantunya, dan orang-orang yang mengalami pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Fretilin atau Falintil setelah invasi Indonesia.

15. Komisi juga berupaya menghormati mereka yang telah meninggal akibat konflik, dan menawarkan dukungan kepada keluarga dan komunitas mereka. Banyak orang telah mati di Timor-Leste selama 25 tahun yang menjadi mandat Komisi, baik karena pemindahan penduduk akibat perang, pengeboman, dan kelaparan, maupun akibat kekerasan yang diarahkan secara khusus. Dalam konteks tersebut, ada risiko nyata bahwa kenangan tentang orang-orang yang telah meninggal ini akan hilang ditenggelamkan statistik umum. Pengakuan bagi orang-orang yang meninggal ini adalah bagian penting dari kerja Komisi. Keterbatasan waktu dan sumberdaya Komisi berarti bahwa usaha ini masih menyisakan banyak tugas.

Acolhimento

Acolhimento merupakan elemen yang tak lazim dimasukkan dalam sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Dalam budaya Timor, ini adalah proses menyambut sepenuh hati, menerima, dan menunjukkan keramahmatan tanpa pamrih. Keramahmatan formal ini diberikan kepada semua manusia, bahkan kepada mereka yang telah merugikan sekalipun. Ini adalah perilaku yang mulia kendatipun masih ada sikap sakit hati dan kemarahan. Sikap ini menciptakan ruang bagi kedua

* Komisi mengakui adanya perdebatan di seputar penggunaan istilah 'korban' yang bisa menunjukkan hal pengorbanan pasif, yang bertentangan dengan istilah yang lebih kuat, 'survivor'. Komisi telah memilih untuk menggunakan istilah korban, sebagian karena konsistensi linguistik di antara tiga bahasa Laporan Akhir, dan sebagian karena pandangan bahwa banyak orang Timor merupakan korban dalam pengalaman mereka mengenai konflik-konflik politik di Timor-Leste. Banyak orang Timor tidak bertahan hidup. Karena Bagian ini menguraikan program-program untuk memberdayakan mereka yang bertahan hidup, maka istilah 'survivor' juga digunakan secara bergantian di sini.

belah pihak untuk berubah. Ini adalah dasar untuk saling pengertian, memohon maaf, dan mencari pengampunan.

Pemahaman orang Timor tentang *acolhimento* sebagian bersumber dari Lukas 15: 11-32, perumpamaan bapak yang kaya dan kedua anak laki-lakinya. Anak bungsu meninggalkan rumah membawa bagian harta dari ayahnya, yang kemudian ia hambur-hamburkan. Karena menjadi miskin dan merasa bersalah, ia memutuskan pulang. Ia bersiap memohon belas kasihan keluarganya. Sebagai anak yang tak berharga, ia tahu bahwa ia hanya layak diperlakukan sebagai pelayan di rumah ayahnya. Melihat anaknya dari kejauhan, sang ayah merasa sangat terharu. Ia berlari memeluknya dan menyambutnya kembali dengan mengadakan pesta pora, tanpa menyalahkan ataupun menghakimi. Melihat hal ini, anak yang lebih tua terluka oleh sikap ayahnya. Merasa sakit hati, ia menentang ayahnya. Sang ayah menjawab, “Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang tetapi didapat kembali.” Perumpamaan ini mengajarkan bahwa rekonsiliasi dapat lebih sulit dicapai bila seseorang merasa diperlakukan tak adil, ketimbang bila seseorang yang memang melakukan kesalahan mencari pengampunan.

Ke arah rekonsiliasi dan memutuskan lingkaran kebencian

Masyarakat dapat dikuatkan dalam semangat *acolhimento* dengan meningkatkan hubungan di antara anggota-anggota masyarakat, dan menyediakan ruang untuk keadilan dan rekonsiliasi. Ini merupakan proses yang panjang dan rumit. Proses ini membutuhkan adanya kebenaran, pengakuan akan kesalahan, dan usaha-usaha untuk mewujudkan perbaikan melalui saling pengertian. Hanya dengan demikianlah akan ada kemungkinan untuk pengampunan dan pemulihan keseimbangan dalam hubungan-hubungan masyarakat.

Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste sejak 1974 yang bersedia mengakui kejahatan mereka dan ingin mencari pengampunan dari komunitas mereka dapat menemukan rekonsiliasi melalui sebuah proses yang sudah dibangun. Ada juga yang ingin kembali ke keluarga mereka, tanah mereka, dan komunitas mereka untuk membantu membangun kembali Timor-Leste. Kekerasan menggerogoti para pelaku. Dalam upaya untuk kembali hidup bersama lagi, kebenaran adalah sebagian dari langkah ke arah pemulihan pribadi dan kepada keadilan komunitas.

Orang dalam komunitas-komunitas yang mengalami kerugian/kehilangan dan yang menghadapi perjuangan yang panjang untuk bertahan, membutuhkan penyembuhan. Kekerasan melukai tubuh

dan merugikan jiwa. Orang mungkin pulih seiring waktu. Orang-orang perlu mengungkapkan kehilangan mereka yang sesungguhnya dan didengarkan. Tetapi, memaafkan bukan berarti melupakan atau memberikan pengampunan (*amnesty*). Orang akan menjadi bebas ketika kebenaran diungkapkan, serta saat ada ketetapan hati dari kedua belah pihak bahwa segala sesuatu dapat menjadi lebih baik. Hal ini memerlukan waktu dan upaya dari kedua belah pihak.

Orang Timor-Leste di Timor Barat

Komisi Kebenaran diusulkan pada akhir 1999. Sepertiga penduduk Timor-Leste telah digerakkan ke Timor Barat, Indonesia. Ada keprihatinan mendalam akan keselamatan dan pengembalian mereka. Dalam waktu tiga bulan setelah Oktober 1999, sekitar 100.000 orang spontan kembali, dan setelah itu, 120.000 orang lagi telah kembali. Sekitar 30.000 orang Timor-Leste masih berada di Timor Barat. Kalau saja mereka bebas dari intimidasi, propaganda negatif, dan dari efek lima tahun menggelandang sebagai pengungsi, mungkin mereka akan kembali ke Timor-Leste. Banyak di antara mereka adalah orang biasa, kehilangan keluarga dan sahabat, dan komunitas mereka di Timor-Leste kehilangan mereka pula.

Proses dan praktik memaafkan

Kembalinya dan pengintegrasian kembali mantan milisi, mantan TNI, dan para pendukung pro-otonomi merupakan tantangan serius. Tantangan yang mungkin lebih ringan adalah yang mengenai para pegawai negeri periode 1974 – 1999. Beberapa orang akan memilih untuk tetap berada di wilayah Indonesia; sebagian lainnya mungkin ingin kembali ke Timor-Leste. Pemerintah Timor-Leste telah mengatakan bahwa sambutan *acolhimento* bisa disampaikan kepada mereka yang memutuskan untuk pulang sembari proses-proses kebenaran dan rekonsiliasi berlangsung. Banyak kelompok dan komunitas telah bekerja keras bagi penyatuan kembali secara damai mereka yang kembali dari Timor Barat. Laporan ini adalah penghargaan kepada ketangguhan dan kesabaran mereka.

Komisi mencoba memediasi kembalinya para pelaku kejahatan ringan ke komunitas mereka melalui proses rekonsiliasi komunitas yang formal, yang memungkinkan berbagai pihak berintegrasi, berdiskusi, dan mencari penyelesaian masalah dan keprihatinan yang belum diselesaikan. Semangat *acolhimento* telah menerangi rancangan proses mediasi ini, dan dikombinasikan dengan tradisi Timor-Leste yang disebut *lisan*^{*}, mengenai kompensasi yang menyembuhkan

* *Lisan* adalah kombinasi dari kepercayaan, kebiasaan, dan tradisi orang Timor-Leste. *Lisan* bervariasi dari komunitas ke komunitas dan pada umumnya merupakan aspek penting dari kehidupan komunitas,

sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Lebih daripada 1.400 orang yang kembali ke seluruh Timor-Leste telah diikuti dalam proses penyembuhan ini, yang dipantau oleh Tim Distrik Komisi dan oleh pemerintah setempat untuk mengantisipasi masalah-masalah yang dialami oleh orang-orang yang baru kembali. Seiring berjalannya waktu pula, para *survivor* dapat memahami dan memperoleh kepercayaan diri kembali dalam langkah mereka untuk memaafkan.

Namun demikian, mereka yang bersalah karena kejahatan berat harus menerima syarat-syarat keadilan legal dalam Pengadilan Timor-Leste sebagaimana dimandatkan oleh Konstitusi. Para *survivor* harus menantikan keadilan dalam kasus-kasus ini.

Tantangan bagi individu, keluarga, dan komunitas, dan tentu saja bagi bangsa Timor-Leste adalah untuk menerima proses penegakan kembali rasa saling percaya dalam berbagai hubungan, untuk hidup bersama secara baik, dan bekerja menciptakan masyarakat yang adil.

Penerimaan dan penjangkauan

Latar belakang

16. Selain program-program rekonsiliasi komunitas dan pencarian kebenaran, Komisi juga menciptakan sebuah program khusus yang disebut *Acolhimento*. Program-program *Acolhimento* diciptakan untuk menanggapi situasi orang-orang yang kembali dan para pengungsi di Timor Barat. Orang Timor-Leste mulai menyeberangi perbatasan ke Timor Barat jauh sebelum Jajak Pendapat pada 30 Agustus dan pengumuman hasil pada 4 September. Orang Timor-Leste sudah mulai menetap sejak April dan Mei 1999 di kamp-kamp di Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur, Indonesia), yang berbatasan dengan Timor-Leste. Gelombang pengungsi besar-besaran ke Timor Barat terjadi pada minggu-minggu awal September 1999 setelah hasil Jajak Pendapat UNAMET diumumkan. Banyak di antara pengungsi ini dievakuasi secara paksa dari Timor-Leste oleh milisi bersenjata dan pasukan-pasukan Indonesia. Jumlah pengungsi yang menyeberang ke Timor Barat adalah sekitar 250.000 orang, yang kemudian ditampung di beberapa kamp pengungsian besar, seperti Noelbaki, Tuapukan, dan Naibonat di Kupang; dua kamp di Kefa; serta sekitar 200 penampungan lainnya.¹ Pengungsi ini diperkirakan mewakili sekitar sepertiga jumlah penduduk Timor-Leste pada saat itu. Tentara-tentara Indonesia dan milisi Timor mengontrol secara ketat kebebasan bergerak para pengungsi untuk masuk dan keluar kamp-kamp ini, juga mengendalikan akses mereka kepada bantuan kemanusiaan.

khususnya di perdesaan. *Lisan* sering disebut sebagai 'adat' dalam bahasa Indonesia.

17. Para pengungsi kembali dari Timor Barat dalam dua gelombang utama. Dalam periode tiga bulan pertama setelah Oktober 1999, lebih daripada 100.000 pengungsi kembali ke Timor-Leste. Kemudian, selama tiga tahun berikut, 120.000 pengungsi kembali ke Timor-Leste dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil.² Orang-orang ini kembali ke situasi penerimaan yang tidak menentu di komunitas mereka. Banyak dari mereka adalah pendukung integrasi sebelum Jajak Pendapat, dan beberapa bahkan menjadi anggota aktif milisi di komunitas mereka. Di beberapa tempat, tanah dan harta mereka telah diambil dan digunakan oleh keluarga lain. Potensi ketidakstabilan karena konflik antara orang-orang yang kembali dan komunitas mereka merupakan persoalan besar bagi Komite Pengarah yang ditugaskan merancang mandat Komisi. (Buku I, Bagian 1, seksi tentang “Latar belakang pembentukan Komisi”, paragraf 1 – 7, memberi perincian lebih jauh mengenai hal ini.)

18. Walaupun sudah banyak pengungsi yang kembali, masih banyak juga yang menetap di Indonesia. Pada Februari 2002 ketika Komisi dibentuk, terdapat lebih daripada 60.000 pengungsi yang masih berada di Timor Barat. Pada 31 Desember 2002, semua pengungsi yang masih di Timor Barat dijadikan penduduk Timor Barat secara resmi dan status sebagai pengungsi dihilangkan. Masih ada antara 25.000 dan 30.000 orang Timor-Leste yang tinggal di lebih daripada 150 lokasi di berbagai penjuru Timor Barat pada waktu itu. UNHCR memperkirakan angka tersebut sampai 30 November 2004 adalah sekitar 25.000.³

19. Hidup tidaklah mudah bagi sebagian besar orang-orang ini. Banyak yang tinggal dalam kondisi-kondisi di bawah standar. Sebagian besar bertahan hidup dengan bertani, walaupun ada beberapa yang mendirikan kios-kios kecil untuk menjual makanan dan barang dagangan lainnya seperti minyak goreng, sabun, garam, dan gula.

20. Selain itu, penduduk setempat di Timor Barat sering tidak senang dengan kehadiran mereka. Orang Timor-Leste kadang bertani atas izin penghuni lokal, tapi kadang-kadang juga tidak. Di beberapa daerah, lahan pertanian sudah merambah sampai ke hutan, menimbulkan tekanan pada lingkungan Timor Barat yang kering dan pada hubungan antara pendatang baru dan masyarakat lokal. Di mana ada orang Timor-Leste di Timor Barat yang menjadi makmur secara ekonomi, terjadi kasus-kasus kecemburuan lokal. Selain itu, di antara para pengungsi itu ada beberapa mantan milisi yang dituntut atas kejahatan-kejahatan berat.

21. Walaupun demikian, masih ada banyak alasan untuk tidak pulang. Alasan-alasan itu termasuk ketakutan terhadap diskriminasi politik dan ekonomi di Timor-Leste terhadap mereka yang memiliki latar belakang pro-otonomi; ketakutan terhadap penuntutan atas kejahatan; ketakutan tidak dapat diterima kembali di komunitas desa lokal; jaminan ekonomi di Indonesia bagi mereka yang memiliki kedudukan di pemerintahan; dan kurangnya kepercayaan terhadap masa depan ekonomi Timor-Leste. Di kamp-kamp atau permukiman, keputusan untuk menetap kadang tidak dilakukan secara sukarela melainkan cenderung dibuat oleh seorang ketua kelompok atau ketua kamp yang punya alasan pribadi

untuk menetap. Menurut pandangan Komisi, hal yang utama adalah banyaknya pengungsi yang tidak mempunyai akses terhadap informasi yang jelas atau akurat mengenai situasi di Timor-Leste.

22. Kenyataan bahwa ada begitu banyak orang Timor-Leste yang masih berada di Timor Barat merupakan kelanjutan dari perpecahan akibat konflik politik. Komisi ini, sebagai sebuah lembaga *acolhimento*, bermaksud menjembatani perpecahan ini dan membantu menciptakan kondisi bagi orang Timor-Leste dari semua latar belakang politik untuk dapat saling menerima. Oleh karena itu program Timor Barat terfokus kepada informasi, dialog, dan menciptakan pengertian yang lebih baik.

Pemantauan terhadap orang-orang yang baru kembali

23. Program pemantauan Komisi terdiri atas pertemuan antara staf dengan orang-orang yang baru kembali untuk memonitor situasi mereka, menyediakan informasi mengenai proses rekonsiliasi komunitas, dan membawa masalah-masalah yang diangkat oleh orang-orang ini kepada otoritas lokal, Komisararis-Komisaris Regional, dan staf Komisi di distrik-distrik, dan juga lembaga-lembaga PBB, seperti UNHCR dan IOM (International Organization for Migration).

24. Pada 2003, 20 kunjungan dilakukan ke pusat persinggahan orang-orang yang kembali: 19 kunjungan ke pusat di Batugade di Bobonaro, dan satu ke Ambeno di Oecussi. Staf Komisi juga mengunjungi 33 desa di tujuh distrik di Timor-Leste di mana ada orang-orang yang baru kembali dari Timor Barat.

Tabel 1: Desa-desanya yang dikunjungi oleh staf Komisi untuk bertemu dengan pengungsi yang kembali

| Desa | Tanggal |
|--|-----------------|
| Leolima (Hatu Udo, Ainaro) | 1 April 2003 |
| Palaka , Memo, Balibó, Raifun (Bobonaro) | 9 Februari 2003 |
| Maumeta (Liquiçá) | 10 Maret 2003 |
| Atabae (Bobonaro) | 10 Maret 2003 |
| Balibo (Bobonaro) | 11 Maret 2003 |
| Maliana (Bobonaro) | 11 Maret 2003 |
| Lauala (Ermera) | 24 Maret 2003 |
| Casa (Ainaro) | 2 April 2003 |
| Ainaro Vila (Ainaro) | 2 April 2003 |

| | |
|---|-----------------|
| Manutasi (Ainaro) | 2 April 2003 |
| Maubessi (Ainaro) | 3 April 2003 |
| Suai Vila, Fohorem, Fatumean, Maucatar (Covalima) | 7 April 2003 |
| Saburai (Maliana, Bobonaro) | 4 Juni 2003 |
| Marobo, Aidaba Leten, Maliana (Bobonaro) | 23 Juni 2003 |
| Cailaco (Bobonaro) | 27 Juni 2003 |
| Vatuboro, (Maubara, Liquiçá) | 1 Agustus 2003 |
| Riheu (Ermera, Ermera) | 2 Agustus 2003 |
| Marobo Bobonaro | 3 Agustus 2003 |
| Leber (Bobonaro, Bobonaro) | 8 Agustus 2003 |
| Beco, Holabolo (Suai, Covalima) | 9 Agustus 2003 |
| Guguleur (Maubara, Liquiçá) | 10 Agustus 2003 |
| Hudilaran (Dom Aleixio, Dili) | 12 Agustus 2003 |
| Gleno (Ermera, Ermera) | 16 Agustus 2003 |
| Lospalos Lore I (Lospalos, Lautém) | 1 Desember 2003 |
| Lospalos (Lautém) | 1 Desember 2003 |

25. Pemantauan ini bukanlah program publik besar. Sebaliknya, ini merupakan kunjungan sederhana kepada orang-orang yang baru kembali dan keluarga mereka, untuk melihat bagaimana mereka diterima dan apakah mereka merasa bahwa mereka sudah menyatu dengan komunitas masing-masing. Staf Komisi juga mengunjungi kepala-kepala desa dan pemuka masyarakat lainnya untuk memeriksa, secara informal, jika ada masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan penerimaan orang-orang kembali ke dalam komunitas mereka.

26. Hubungan kerja dengan UNHCR dan IOM terutama adalah untuk mengatur kunjungan-kunjungan kepada pengungsi yang kembali dan untuk berbagi informasi mengenai kebutuhan orang-orang itu. UNHCR dan IOM memberitahu Komisi jika ada program-program lintas-batas di mana Komisi dapat ikut berpartisipasi, termasuk kunjungan Presiden dan kunjungan resmi pejabat pemerintah lainnya.

Hal-hal yang ditemukan oleh Komisi

27. Banyak pengungsi kembali dengan perasaan yang bercampur-aduk, antara terkucil, tidak berdaya, dan trauma, juga dengan kebimbangan terhadap kelangsungan ekonomi dan status sosial mereka. Ketika mereka tiba, mereka menemukan banyak perubahan di Timor-Leste dengan pemerintahan independen dan perangkat hukum baru, dan sistem moneter serta ekonomi yang baru.

28. Komisi memperhatikan bahwa sebagian besar orang-orang yang kembali diterima oleh komunitas mereka dengan tangan terbuka. Di beberapa desa, masyarakat membantu orang-orang itu membangun penampungan sementara, atau memberikan akomodasi bagi mereka yang membutuhkan. Para pengungsi yang kembali itu mendapat akses untuk fasilitas umum seperti air, klinik-klinik kesehatan, dan sekolah-sekolah. Orang-orang ini juga dapat ikut dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di distrik-distrik, seperti guru, perawat, polisi, dan angkatan bersenjata.

29. Dalam beberapa kasus, kembalinya pemimpin eks-milisi disambut dengan kata-kata kasar para pemuda di komunitasnya. Walaupun demikian, dalam sebagian besar kasus, polisi setempat cepat mengambilalih situasi dan, untuk mencegah terjadinya kekerasan, berpatroli secara reguler di daerah yang belakangan didatangi orang-orang yang kembali. Sering konflik antara orang-orang yang kembali dengan penduduk lokal terjadi, bukan karena perbedaan politik melainkan karena perseteruan keluarga atau suku yang telah berjalan lama, berkenaan dengan masalah tanah atau masalah adat lainnya.

30. Untuk orang-orang yang kembali, tantangan terbesar yang dihadapi adalah mata pencaharian mereka. Banyak yang telah kehilangan aset mereka selama kekerasan 1999 dan tak mampu menutupi kehilangan mereka setelah bertahun-tahun di kamp pengungsi. Sengketa atas tanah dan properti sering menjadi masalah utama. Beberapa dari orang-orang yang kembali pernah menjadi pegawai negeri sipil selama pendudukan Indonesia dan menerima gaji bulanan. Kelambatan mereka kembali ke Timor-Leste berarti bahwa sebagian besar kesempatan kerja yang terbatas di distrik-distrik telah diambil oleh orang-orang lain. Keluarga-keluarga ini harus kembali mempelajari keahlian-keahlian pertanian subsisten. Sebagai akibatnya, banyak di antara orang-orang ini memilih memulai kembali hidup mereka jauh dari kampung halaman dan pindah ke Dili atau daerah perkotaan lainnya, untuk mencari kesempatan lain guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

31. Untuk para wanita-orangtua tunggal dan anak-anak mereka, kelangsungan hidup sehari-hari lebih sulit. Dalam beberapa kasus, para perempuan dan anak-anak kembali ke Timor-Leste dalam kondisi kesehatan yang buruk, yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang selama berada di kamp. Setelah kembali, mereka harus menanam dan menunggu hasil panen berikutnya untuk mereka makan. Walaupun otoritas lokal, lembaga PBB, dan LSM memberi perhatian khusus kepada keluarga-keluarga ini, tetap masih ada beberapa yang terlewatkan.

32. Komisi menemukan sejumlah kecil penduduk yang, setelah kembali ke desa mereka, pada akhirnya memilih kembali ke Timor Barat. Ini terjadi di desa-desa seperti Lauala (Ermera, Ermera) dan Leimea (Hatulia, Ermera), Maubara (Maubara, Liquiçá) dan Balibo Kota (Balibo, Bobonaro). Komisi melakukan kunjungan ke desa-desa ini dan bertemu dengan orang-orang yang memutuskan kembali lagi ke Timor Barat dengan alasan yang berbeda-beda. Dalam beberapa kasus, orang-orang itu masih memiliki anggota keluarga dekat yang tinggal di Timor Barat. Dalam kasus-kasus lainnya, orang-orang yang kembali adalah eks-pemimpin milisi yang belum mendapat kesempatan ikutserta dalam proses rekonsiliasi komunitas dan mengalami intimidasi dan serangan ringan oleh penduduk lokal.

Mendampingi pengungsi pulang

Staf Komisi, bersama dengan UNHCR dan IOM, mendampingi sejumlah pengungsi yang kembali dalam perjalanan pulang mereka. Biasanya mereka adalah orang-orang yang dianggap rentan, dan didampingi untuk mengurangi kegelisahan mereka. Berikut ini tiga contoh yang terjadi pada Mei-Juni 2003:

Pada 29 Mei 2003, staf Komisi mendampingi seorang perempuan dan anak-anaknya ke Laga, Baucau. Suaminya, yang pernah bertugas sebagai anggota Milsas dan sekarang ini bekerja di Koramil di Kupang (Timor Barat), ikut dalam kunjungan dengan berpaspor Indonesia. Dia ingin membawa keluarganya pulang dan kemudian kembali ke Timor Barat. Ketika mereka tiba di Laga, mereka disambut dengan hangat dan para penduduk lokal membantu mereka menurunkan barang-barangnya.

Pada 10 Juni 2003, seorang laki-laki berumur 19 tahun pulang ke Leopa (Dato, Liquiçá), seorang diri. Staf Komisi mendampingi dia ke rumahnya di mana orangtuanya menerima dia dengan hangat.

Pada 12 Juni 2003, staf Komisi mendampingi seorang laki-laki berumur 34 tahun dengan anak laki-lakinya yang berumur 5 tahun pulang ke desanya di Aidabaleten (Atabae, Bobonaro). Dia seorang mantan anggota milisi dari suatu kelompok yang dinamakan Harmoni, tetapi walaupun pernah ikut berpatroli, dia tidak melakukan kejahatan apa-apa. Dia telah mengunjungi keluarganya sebanyak enam kali sebelum dia diyakinkan untuk kembali secara permanen. Keluarganya dan penduduk lokal menerima dia dengan baik, dan membantu membongkar truk IOM yang membawa barang-barangnya.

Kesan-kesan dari program pemantauan

33. Masyarakat Timor-Leste telah menunjukkan tingkat penerimaan dan keinginan untuk menerima kembali para mantan pengungsi. Namun, keadaan seperti ini tidak boleh diterima begitu saja. Masih banyak orang Timor-Leste di Timor Barat yang mungkin akan memilih kembali di tahun-tahun mendatang. Selain itu bagi beberapa orang yang kembali dalam tahun-tahun belakangan ini, mungkin masih ada masalah mengenai reintegrasi penuh ke dalam komunitas mereka. Banyaknya permintaan yang terus mengalir untuk diadakannya audiensi rekonsiliasi komunitas menunjukkan bahwa masih banyak isu-isu di tingkat lokal yang belum selesai, termasuk yang berkaitan dengan mereka yang telah kembali sejak 1999.

34. Adalah penting untuk terus memonitor situasi orang-orang yang baru kembali dan bekerja dengan komunitas untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Ini akan melibatkan masyarakat sipil, LSM, dan berbagai instansi pemerintah. Bagian 11: Rekomendasi membahas kebutuhan untuk pengawasan reintegrasi orang-orang yang kembali dan potensi konflik di masa mendatang.

Menjangkau Timor Barat

35. Komisi tidak dirancang untuk membantu memulangkan kembali orang Timor-Leste dari Timor Barat, dan tidak punya wewenang untuk bekerja di negara lain selain Timor-Leste. Namun, tugas memasyarakatkan *acolhimento* dan rekonsiliasi menjadi dasar yang kuat untuk menjangkau para pengungsi dan memberikan informasi mengenai Komisi serta situasi di Timor-Leste. Sebagai lembaga negara yang independen, Komisi ingin menunjukkan kepada pengungsi-pengungsi yang masih ada, bahwa negara baru Timor-Leste bersungguh-sungguh dengan komitmennya untuk membangun suatu masyarakat yang utuh, yang berdasar pada aturan hukum dan hak asasi manusia universal. Juga dianggap penting untuk memberi kesempatan kepada orang Timor-Leste di Timor Barat untuk berpartisipasi dalam program pencarian kebenaran dengan memberikan pernyataan mereka kepada Komisi.

36. Pada akhir 2002, Komisi merancang program Timor Barat. Komisi memulai program ini pada awal 2003. Karena pertimbangan efisiensi dan keamanan, dan karena mandatnya hanya di wilayah Timor Leste, Komisi memutuskan bekerja melalui LSM Indonesia yang sudah menangani masalah pengungsi di Timor Barat.

Program menjangkau Timor Barat

37. Program Timor Barat Komisi memiliki empat tujuan utama:

1. Meningkatkan kesadaran dan pengertian di kalangan para pengungsi dan pemimpin-pemimpin utama komunitas tentang mandat Komisi.
2. Memfasilitasi penyebaran informasi tentang kegiatan Komisi yang berhubungan dengan dua fungsi utamanya, yaitu pencarian kebenaran dan rekonsiliasi komunitas.

3. Menjamin bahwa Komisi akan mendengar orang Timor-Leste dari semua pihak dalam konflik politik untuk mempersiapkan Laporan Akhirnya.
4. Menyampaikan pesan kepada para pengungsi Timor-Leste di Timor Barat bahwa Timor-Leste bersungguh-sungguh dalam usaha pemulihan perpecahan masa lalu dan memperbaiki kehidupan pribadi dan komunitas, berdasarkan prinsip-prinsip keterlibatan semua pihak dan penghormatan pada hak asasi manusia.

38. Program Timor Barat Komisi umumnya terdiri atas penyebaran informasi kepada para pengungsi mengenai proses rekonsiliasi komunitas dan melibatkan mereka dalam pencarian kebenaran. Dalam hal pekerjaan rekonsiliasi, tujuannya bukan untuk melakukan prosedur rekonsiliasi di Timor Barat, melainkan untuk memastikan bahwa komunitas, termasuk para pelaku pelanggaran ringan, memahami bagaimana Komisi dapat membantu menyatukan kembali orang-orang dengan komunitas asal mereka, jika mereka memilih kembali ke Timor-Leste.

39. Menawarkan kesempatan kepada orang-orang untuk memberikan pernyataan, sebagai jalan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan penting bagi pekerjaan pencarian kebenaran Komisi. Jalan ini memberi kepastian bahwa Komisi telah mendengar kisah dari semua pihak yang terlibat konflik politik. Ini juga jalan untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatian bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia, dan cara ini diharapkan dapat membantu proses pemulihan pribadi mereka.

40. Kelompok-kelompok tertentu dalam komunitas di Timor Barat menjadi sasaran utama dari program ini. Kelompok ini mencakup para pemimpin politik pro-otonomi dan mantan pemimpin milisi, individu dan kelompok-kelompok yang belum membuat keputusan mengenai repatriasi, perempuan sebagai kelompok yang paling mungkin tidak bisa membuat pilihan bebas mengenai repatriasi, dan mereka yang telah memilih tidak kembali tapi memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diceritakan kepada Komisi.

Pelaksanaan program

41. Pada Januari 2003, Komisi mengundang lima LSM Timor Barat ke kantor pusatnya di Dili untuk merencanakan program yang didasarkan pada tujuan-tujuan di atas. Masing-masing LSM mempunyai pengalaman bekerja dengan pengungsi-pengungsi Timor-Leste di Timor Barat. LSM-LSM tersebut adalah:

- CIS (Center for Internally Displaced Persons Service)
- Truk-F (Tim Relawan untuk Kemanusiaan - Flores)
- Lakmas (Lembaga Advokasi anti-Kekerasan terhadap Masyarakat Sipil)
- Yabiku (Yayasan Amnaut Bife “Kuan” — Yayasan Peduli Perempuan Kampung)
- YPI (Yayasan Peduli Indonesia)

42. Dengan dukungan dari Yayasan PIKUL (Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal) dan CRS (Catholic Relief Services), kelima LSM itu membentuk koalisi dan bekerjasama dengan Komisi.

43. Koalisi tersebut dibagi menjadi empat tim, masing-masing bertugas di satu kabupaten di Timor Barat. Tiga dari empat tim bekerja di kabupaten-kabupaten di mana mereka sudah memiliki hubungan panjang dengan para pengungsi. Mereka adalah: CIS di Kupang, Lakmas dan Yabiku di Kefamenanu (Kabupaten Timor Tengah Utara), dan YPI di Atambua (Kabupaten Belu). Tim keempat adalah tim dari Kupang yang dipindahkan ke So'e (Kabupaten Timor Tengah Selatan), dan dengan cepat dapat membangun hubungan dengan orang-orang penting dalam komunitas pengungsi tersebut.

44. Sebuah program orientasi selama dua minggu diberikan kepada Koalisi LSM di Timor-Leste pada Februari 2003. Di antaranya sesi pengarahan dan perencanaan dengan para Komisaris Nasional dan staf Komisi, dan meningkatkan pemahaman mengenai latar belakang, mandat, dan organisasi Komisi. Juga diberikan pelatihan mengenai isu-isu seperti hak-hak asasi manusia dan keadilan transisi, dan keahlian spesifik seperti pengambilan pertanyaan. Kelompok tersebut melakukan perjalanan kerja ke distrik-distrik di Timor-Leste untuk mengamati tim distrik Komisi bekerja di dalam komunitas. Kelompok ini juga menghadiri audiensi nasional pertama Komisi yang bertemakan pemenjaraan politik.

45. Rencana kerja lima bulan kemudian dikembangkan bersama Komisi, yang menjamin bahwa semua komunitas pengungsi di Timor Barat mendapat kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang CAVR dan berpartisipasi dalam proses pengambilan pernyataan.

46. Begitu program dimulai, para Komisaris Nasional dan Regional melakukan kunjungan bulanan ke Timor Barat untuk memonitor kemajuan Koalisi, membantu semua permasalahan, dan membantu proses informasi publik. Koalisi mencatat dalam laporan akhirnya kepada Komisi bahwa: "kunjungan-kunjungan para Komisaris bagaikan lokomotif yang membawa para pengungsi untuk menghadiri diskusi kelompok sasaran." Kunjungan pemantauan yang pertama pada akhir Maret 2003 membantu meluncurkan program tersebut secara publik. Para Komisaris bertemu dengan pemimpin-pemimpin pemerintahan provinsi, komunitas gereja, LSM, dan media untuk membangun dukungan bagi kegiatan-kegiatan program. Sebuah rekomendasi tertulis dari Gubernur Nusa Tenggara Timur sangat berguna bagi Koalisi dalam mendapatkan akses ke kamp-kamp dan kesediaan polisi dan militer untuk memberi jaminan pengamanan.

Sosialisasi kepada komunitas pengungsi mengenai Komisi

47. Tujuan utama program ini adalah untuk berbagi informasi dengan komunitas-komunitas pengungsi mengenai Komisi, dan bagaimana relevansi Komisi ini terhadap mereka.

48. Dua metode utama untuk memberitahu para pengungsi mengenai pekerjaan Komisi adalah: diskusi langsung dengan para pengungsi dan pemimpin utama mereka (lihat tabel di bawah, setelah paragraf 49), dan penyebaran informasi melalui media cetak, radio, dan video. Untuk membangun hubungan dan kepercayaan, tim Koalisi melakukan kunjungan pribadi kepada para pemimpin utama pengungsi dan para koordinator kamp sebelum mengadakan pertemuan komunitas. Para Komisararis Nasional dan Regional dan staf CAVR juga mengunjungi kamp-kamp dan bertemu dengan para mantan komandan milisi dan pemimpin politik pro-otonomi.

49. Penyebaran informasi dilakukan termasuk dengan memberikan 15 episode program radio yang diproduksi oleh Komisi, *Dalan ba Dame* (Jalan Menuju Damai), dipancarkan dari Dili dan disiarkan melalui sebuah stasiun radio di Kupang. Radio Timor Barat juga menyiarkan dialog antara para Komisararis dengan tokoh-tokoh yang sudah dikenal pengungsi, seperti anggota-anggota Koalisi, seorang pendeta Timor Barat, dan pemimpin-pemimpin pengungsi. Film-film Komisi, termasuk *Dalan ba Dame* (Jalan Menuju Damai, sebuah perkenalan mengenai Komisi) dan rekaman video mengenai pertemuan rekonsiliasi komunitas serta beberapa audiensi publik nasional Komisi merupakan cara yang menyenangkan dan menarik bagi para pengungsi untuk memahami pekerjaan Komisi. Contohnya, film mengenai audiensi rekonsiliasi di sebuah desa memperlihatkan keadaan komunitas dan distrik tempat asal banyak pengungsi, dan membantu menunjukkan bagaimana komunitas tersebut berusaha mendamaikan konflik di masa lalu. Film dan radio sangat penting karena banyak pengungsi memiliki keahlian baca tulis yang terbatas.

Tabel 2: Pembagian berdasarkan Wilayah Diskusi Kelompok Sasaran /Pertemuan Komunitas

| Kabupaten di Timor Barat | Total | Peserta | |
|--------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| | | L | P |
| Belu | 33 | 2.681 | 373 |
| Timor Tengah Utara | 31 | 365 | 163 |
| Timor Tengah Selatan | 17 | 1.084 | 318 |
| Kupang | 18 | 860 | 146 |
| Total | 99 | 4.990 (83%) | 1.000 (17%) |

Sumber: Laporan Kegiatan Koalisi LSM, 13 Februari 2003 – 23 Juli 2003

50. Media cetak yang didistribusikan di empat wilayah sasaran antara lain berupa buletin, poster, majalah, pamflet Komisi berkenaan dengan proses rekonsiliasi komunitas, kaus Komisi, dan sebuah pamflet khusus yang diproduksi bersama oleh Komisi dan Koalisi LSM Timor Barat.

Pengambilan pernyataan

51. Pengambilan pernyataan untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia ternyata merupakan hal sulit bagi semua tim Timor Barat. Pada bulan-bulan pertama pekerjaan mereka, tidak ada tim yang mengambil pernyataan karena mereka berfokus untuk menjalin hubungan dengan komunitas pengungsi, menjelaskan mandat Komisi dan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi. Dengan cara ini masyarakat dapat memutuskan apakah mereka perlu atau tidak perlu memberikan pernyataan.

52. Tim telah menetapkan target yang tidak terlalu tinggi, yaitu sebanyak 272 pernyataan, yang kurang-lebih konsisten dengan target 1% dari komunitas. Namun pada akhirnya hanya 90 pernyataan yang dapat diambil. Ada beberapa alasan untuk hasil seperti ini, tetapi secara umum hal ini mencerminkan kehati-hatian orang dalam komunitas pengungsi saat berhubungan dengan Koalisi LSM dan Komisi. Hal ini dibahas lebih lanjut di bagian berikutnya mengenai tanggapan pengungsi (paragraf 55 – 73).

53. Tabel 3 menunjukkan bahwa tim di Soe, di Timor Tengah Selatan, dapat mengumpulkan pernyataan terbanyak. Yang menarik dari hasil ini adalah dua belas pernyataan berasal dari Kodim di wilayah Soe, dan diambil dari para pengungsi Timor-Leste yang berafiliasi dengan militer. Tim Atambua (Belu), dekat perbatasan Timor-Leste dan tempat yang paling banyak dihuni pengungsi, mendapatkan jumlah pernyataan terbanyak kedua.

54. Walaupun jumlah pernyataan yang diambil secara keseluruhan rendah, tetaplah penting bahwa Komisi menawarkan kesempatan ini kepada komunitas pengungsi. Terlebih lagi, isi pernyataan-pernyataan tersebut menjadi kontribusi penting untuk usaha pencarian kebenaran Komisi.

| Kabupaten di Timor Barat | Total | Peserta | |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| | | L | P |
| Belu | 28 | 23 | 5 |
| Timor Tengah Utara | 9 | 8 | 1 |
| Timor Tengah Selatan | 50 | 43 | 7 |
| Kupang | 3 | 3 | - |
| Total | 90 | 77 (86%) | 13 (14%) |

Sumber: Laporan Kegiatan Koalisi LSM, 13 Februari 2003 – 23 Juli 2003

Tanggapan pengungsi

55. Banyak pengungsi yang ingin tahu mengenai perkembangan mutakhir di Timor-Leste, terutama tentang pekerjaan rekonsiliasi Komisi yang berbasis komunitas. Akan tetapi, tanggapan dominan terhadap program Timor Barat berupa sikap waswas. Bahkan dalam beberapa kasus, para anggota Koalisi ditolak masuk ke kamp; dalam beberapa kasus lain, pengungsi tidak berpartisipasi dalam kelompok-kelompok diskusi ketika diberi kesempatan.

56. Koalisi LSM menemukan bahwa ada tiga macam tanggapan dari pengungsi terhadap pekerjaan Komisi di Timor Barat: mayoritas yang tetap diam; mereka yang memberi dukungan dengan antusias atau hati-hati; dan mereka yang menolak Koalisi LSM dan Komisi. Bagian ini memasukkan kutipan-kutipan dari tanggapan orang Timor-Leste di Timor Barat, sebagaimana dilaporkan di dalam laporan Kegiatan Koalisi LSM, 13 Februari sampai 23 Juli 2003.⁴

57. Sebagian besar pengungsi tetap tidak bersuara. Beberapa orang memiliki pandangan yang jelas mengenai rekonsiliasi; tapi, karena isu ini telah dipolitisasi, mereka memilih tetap diam. Yang lain, “massa yang mengambang”, tak memiliki sikap sendiri, dan pandangan mereka ditentukan oleh sekelompok kecil pemimpin elite yang mengendalikan struktur kekuasaan dalam kamp tersebut. Koalisi LSM sangat berhati-hati untuk tidak memaksa orang-orang untuk bertanya atau memberikan pendapat mereka, demi melindungi keselamatan pribadi mereka. Tujuan utama program penjangkauan ini adalah untuk memberi informasi.

58. Beberapa pengungsi bangga bahwa Timor-Leste telah memperoleh kemerdekaan, seperti yang diungkapkan seorang laki-laki dari Maubisse (Ainaro):

Kami sangat menghargai apa yang telah diberi oleh saudara-saudara kami dan sangat menghargai Komisi. Ini benar-benar bisa dikatakan sebagai mencari kebenaran. Kami juga berjuang untuk rakyat Timor-Leste walaupun pendapat kami berbeda-beda. Sekarang Timor-Leste sudah merdeka, kami harap bahwa di sana mereka sendiri merasa mereka telah merdeka, bahwa mereka memiliki Timor-Leste. Bahkan kami orang-orang pro-otonomi sebenarnya menginginkan kemerdekaan, mungkin dalam 15 tahun, tetapi saudara-saudara kami tidak sabar, mereka ingin kemerdekaan secepatnya... kami juga menghargai Fretilin. Hasil yang baik dari perjuangan Fretilin adalah bahwa Timor-Leste bisa dikenal dan merdeka. Kita semua harus bangga dengan perjuangan mereka.

59. Di antara mereka yang berada dalam kategori “menolak” adalah pengungsi-pengungsi yang mungkin pernah memiliki harapan untuk rekonsiliasi. Seperti yang dikatakan oleh seorang pemimpin di Kamp Naibonat di luar Kupang:

Saya bosan mendengar tentang rekonsiliasi. Saya sendiri menghadiri proses semacam ini di Bali [Indonesia], tapi apa hasilnya? Tidak ada. Kami tidak tahu apa yang akan menjadi hasil akhir dari proses rekonsiliasi Komisi... tapi jika rekonsiliasi hanya bicara saja, pembalasan dendam akan berlanjut.

60. Komentar orang-orang lainnya lebih bersikap memusuhi. Seorang pengungsi mengatakan bahwa Komisi tidak lebih daripada sekadar proyek yang menghabiskan uang para donor yang memiliki agenda tersembunyi, yaitu semata-mata membuat Timor-Leste menjadi negara boneka mereka. Dia berkata bahwa dengan hanya dua tahun mandat bagaimana mungkin bisa menyelidiki dengan tuntas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama lebih daripada 20 tahun? Yang lainnya berkata bahwa mereka merasa mendukung program Komisi sama saja dengan mengkhianati Indonesia. Tim Koalisi memperhatikan bahwa beberapa koordinator dan pemimpin kamp, walaupun terkesan mendukung Komisi selama diskusi kelompok, belakangan berkata bahwa yang dikatakan oleh Koalisi adalah kebohongan belaka.

61. Sementara para Komisariss mendengar banyak komentar negatif dan skeptis mengenai Komisi pada kunjungan-kunjungan mereka ke Timor Barat, mereka juga mendengar beberapa komentar positif.

62. Diskusi-diskusi dengan komunitas pengungsi menunjukkan bahwa kepedulian orang tentang status politik Timor-Leste sebelum kemerdekaan telah digantikan oleh kekhawatiran soal ekonomi. Ada skeptisisme yang mendalam mengenai kemampuan negara ini untuk berkembang karena sumberdaya manusia yang terbatas, teknologi yang tidak maju, infrastruktur yang lemah, dan besarnya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Juga terdapat masalah mengenai kendala pemulangan kembali.

63. Saat mengadakan kunjungan ke Timor Barat, para Komisariss dan staf Komisi memperhatikan bahwa komunitas pengungsi memiliki sehimpunan kebingungan yang konsisten antarkomunitas mengenai kepulangan kembali ke Timor-Leste. Kebingungan ini mencakup:

Ketakutan

64. Banyak pengungsi yang mengatakan bahwa mereka takut kembali ke Timor-Leste mereka mendengar bahwa pengungsi yang berkunjung atau pulang menjadi korban teror dan intimidasi, atau bahkan pembunuhan. Beberapa berkata mereka akan kembali ke Timor-Leste hanya jika mereka diberi jaminan keamanan. Yang lain takut kembali karena takut dihukum. Mereka yang tak mau memberikan pernyataan juga menyampaikan ketakutan ini. Orang-orang ini sering meminta rekonsiliasi berdasarkan pelupaan akan masa lalu, semacam amnesia sejarah, atau *kore metan massal*.*

* *'Kore metan massal'* adalah frase yang mencampurkan bahasa Tetum dan bahasa Indonesia dan digunakan oleh beberapa orang Timor-Leste di dalam kamp-kamp Timor Barat. *'Kore metan'* (bahasa Tetum) adalah acara adat yang menandai akhirnya masa berdukacita 12 bulan (arti harfiah: mengangkat hitamnya). Ini adalah frase yang digunakan oleh beberapa orang Timor-Leste ketika mereka berbicara dengan komisi di Timor Barat.

Pengucilan sosial

65. Beberapa pengungsi meragukan maksud baik yang dikumandangkan Timor-Leste untuk merangkul mantan pendukung penguasa Indonesia. Mereka mendengar bahwa pendukung pro-otonomi di Timor-Leste diperlakukan sebagai rakyat kelas dua dan tiga, mengalami diskriminasi dalam mendapatkan kesempatan pekerjaan dan akses kepada layanan-layanan sosial. Yang lainnya menyebutkan adanya suatu hierarki sosial yang akan sangat merugikan mereka. Hierarki ini menempatkan orang-orang asing di tempat teratas, diikuti oleh orang Timor yang pernah tinggal di Portugal, dan kemudian kelompok elite prokemerdekaan dan pendukung prokemerdekaan lainnya, dan pendukung pro-otonomi di posisi paling bawah.

Pertimbangan ekonomi

66. Keluhan yang selalu muncul dalam diskusi kelompok adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk masuk ke Timor-Leste, sesuatu yang mungkin lebih berlaku bagi mereka yang bermaksud sekadar berkunjung ke Timor-Leste ketimbang kembali pulang. Mereka yang masih bekerja sebagai pegawai negeri sipil Indonesia berkata bahwa selama mereka tetap di Timor Barat mereka akan mendapat gaji yang cukup untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Seorang laki-laki bertanya, “Untuk apa kembali ke Timor-Leste di mana saya tidak ada jaminan untuk kerja?” Masalah lain yang diungkapkan adalah status aset terdahulu—banyak yang mengatakan bahwa mereka ragu untuk kembali jika mereka tidak bisa memperoleh kembali tanah dan rumah mereka yang dulu. Lainnya menyuarkan kekhawatiran mengenai tingginya ketergantungan Timor-Leste pada negara-negara donor. Seorang pengungsi dari Lospalos (Lautém) di kamp Tuapukan dekat Kupang, berkata kepada Komisaris dan staf Komisi:

Saudara-saudara, Anda seharusnya memberi informasi mengenai situasi yang sebenarnya di Timor-Leste. Di sana hidup penuh dengan penderitaan, penderitaan yang terus menerus...di sana saudara jauh lebih menderita daripada kita di sini.

67. Dia meneruskan dengan berbicara kepada para pengungsi yang hadir,

Mungkin orang-orang putih merasa kasihan kepada mereka dan memberi mereka uang untuk melaksanakan tugas ini [rekonsiliasi]...Apakah saudara-saudara ini ingin kemajuan atau kemunduran? Bagi kami, hidup bersama Republik Indonesia adalah kemajuan, [bukan dengan] saudara-saudara ini yang hanya datang dengan janji-janji palsu.

Ras

68. Beberapa pengungsi menyatakan penolakan penuh terhadap orang-orang kulit putih, yang dipandang sebagai orang-orang yang sangat berkuasa atas Timor-Leste. Beberapa mengatakan mereka tidak akan kembali ke Timor-Leste selama orang-orang kulit putih masih menetap di sana.

Isu politik

69. Walaupun masalah kedaulatan Timor-Leste tidak mendominasi diskusi-diskusi kelompok, ada masalah-masalah politik yang diutarakan. Beberapa pengungsi merasa dirisaukan dengan digunakannya bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, khawatir apabila mereka kembali anak-anak mereka akan menghadapi kesulitan. Lainnya berkata bahwa rekonsiliasi tak mungkin terjadi sebelum tiga partai utama pada 1974 - 1975—UDT, Fretilin, dan Apodeti—mempertanggungjawabkan tindakan mereka di masa lalu. Lainnya bersikukuh bahwa rekonsiliasi harus dimulai di antara para pemimpin dengan latar belakang politik yang berbeda, sebelum rakyat biasa dapat diharapkan ikut berpartisipasi dalam upaya rekonsiliasi. Fokus pada para pemimpin ini tampak sebagai cara bagi beberapa pengungsi untuk membebaskan diri dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan kriminal, karena mereka hanya “orang-orang kecil” yang tidak tahu apa-apa, atau hanya menjalankan perintah dari atasannya. Seorang pengungsi dari Baucau di kamp Tuapukan menyimpulkan hal ini saat berkata:

Jika pemimpin-pemimpin pro-otonomi dan prokemerdekaan bersatu kami pasti akan kembali; karena hal-hal di masa lalu adalah perintah, dan kami orang kecil hanya melaksanakannya, dan sebagai akibatnya kamilah yang paling menderita.

70. Ada kecenderungan untuk melihat bahwa mandat pencarian kebenaran Komisi hanya terbatas pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada 1999. Hal ini disertai dengan tuntutan-tuntutan bahwa sejarah hanya bisa “diluruskan”, jika pelanggaran-pelanggaran yang dimulai pada 1974-1975 diselidiki tuntas.

Pengungsi perempuan dan rekonsiliasi

71. Dalam hal kebebasan mereka berinteraksi dengan Koalisi LSM, perempuan secara khusus dipengaruhi oleh struktur kekuatan yang ada dalam kamp. Posisi perempuan dalam rekonsiliasi dan repatriasi hampir sepenuhnya ditentukan oleh suami, ayah, dan paman mereka, yang telah membawa mereka ke Timor Barat. Secara ekonomi dan fisik mereka bergantung pada sosok-sosok lelaki ini, yang sering mengintimidasi mereka tapi sekaligus berfungsi sebagai pelindung mereka dari para lelaki lain.

72. Baik Tabel 2 dan 3 di atas menunjukkan bahwa penjangkauan terhadap perempuan tidak seefektif penjangkauan terhadap laki-laki. Tim-tim Koalisi LSM mencatat bahwa bahkan ketika perempuan menghadiri diskusi kelompok sasaran, mereka jarang berbicara atau hanya setuju dengan apa yang dikatakan oleh suami mereka atau para pemimpin pengungsi. Koalisi LSM menghubungkan lemahnya partisipasi perempuan dengan beberapa hal, seperti kebudayaan patriarki orang Timor, peran perempuan yang terbatas hanya pada keluarga, dan rekonsiliasi yang tampak sebagai isu politik yang harus dihadapi oleh laki-laki saja. Selain itu pada umumnya perempuan juga memiliki tingkat pendidikan

dan kesehatan yang lebih rendah daripada laki-laki, dan sering menjadi korban pelecehan fisik dan psikologis.

73. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk dapat memberi akses kepada perempuan terhadap informasi dan kemampuan untuk memainkan peran yang menentukan dalam mengambil keputusan untuk kembali ke Timor-Leste.

Refleksi tentang program

74. Program Timor Barat yang berjalan enam bulan dengan bekerjasama dengan LSM Indonesia merupakan bagian penting dari pekerjaan Komisi. Dalam mandat, waktu, dan sumberdaya yang terbatas Komisi mencoba menjangkau orang Timor-Leste yang menetap di Timor Barat, dengan cara-cara yang praktis dan efektif. Hubungan kerja dan maksud baik yang ditunjukkan oleh pemerintah, LSM, serta lembaga-lembaga masyarakat sipil dan perorangan merupakan dasar penting untuk pekerjaan di masa mendatang, yang harus tetap menjadi prioritas bagi pemerintah Timor-Leste dan Indonesia, LSM, pekerja-pekerja sosial, dan komunitas lokal di masing-masing negara.

75. Komisi menyadari kerumitan dan kepekaan dalam melaksanakan program penjangkauan di Timor Barat. Sikap hati-hati yang diambil para pengungsi terhadap pekerjaan Komisi berarti bahwa Komisi tidak dapat mencapai angka target pernyataan yang diambil. Bagaimanapun juga, dalam situasi tersebut, adalah suatu pencapaian penting bahwa banyak pengungsi diberi kesempatan menyampaikan kisah mereka dan mengetahui tentang program rekonsiliasi Komisi dan tentang kehidupan di Timor-Leste yang merdeka.

76. Pengalaman Komisi di dalam bidang ini menunjukkan bahwa upaya mencapai rekonsiliasi dengan para pengungsi di Timor Barat akan membutuhkan komitmen dan pemikiran kreatif. Kerumitan isu-isu ini membutuhkan komitmen jangka panjang yang melibatkan pemerintah Timor-Leste dan organisasi-organisasi serta institusi nonpemerintah, dan dengan dukungan dari masyarakat internasional. Bagian 'pelajaran yang dipetik' pada akhir bagian ini akan mengusulkan prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar upaya ini. Rekomendasi Komisi akan membahas isu-isu ini secara lebih terperinci. (Lihat Bagian 11: Rekomendasi)

Pemulihan martabat korban

Pendahuluan

77. Kerusakan yang diakibatkan oleh kekerasan terhadap kehidupan orang-orang, keluarga, dan komunitas mereka selama 25 tahun sangat mendalam. Komisi tidak berharap dapat mewujudkan pemulihan individu atau komunitas, baik secara cepat atau menyeluruh, dengan hanya melakukan satu program. Karena itu,

dikembangkanlah suatu program multidimensi untuk membantu, walau hanya sedikit, proses pemulihan martabat para korban pelanggaran hak asasi manusia.

78. Beberapa bagian dari program Komisi bermaksud menangani kebutuhan nasional untuk pemulihan. Pada tingkat tertentu, seluruh masyarakat Timor-Leste adalah korban dari konflik-konflik politik yang terjadi antara 1974 dan 1999. Oleh karena itu fokus awal dari kerja dukungan pada korban yang dilakukan Komisi adalah mempersiapkan tim-tim distrik untuk mengambil pendekatan yang terpusat pada korban dalam kerja pencarian kebenaran dan rekonsiliasi komunitas mereka. Sering dikatakan bahwa pengambilan pernyataan merupakan langkah pertama dalam proses pemulihan yang didukung oleh Komisi. Para pengambil pernyataan di distrik dilatih dengan berbagai metode kerja yang peka, termasuk agar memiliki kemampuan mengidentifikasi saat pemberi pernyataan memerlukan dukungan lebih lanjut. Para pengambil pernyataan juga menyerahkan orang-orang yang rentan kepada tim Dukungan untuk Korban, yang kemudian akan berusaha menghubungkan mereka dengan pertolongan spesialis. Tim rekonsiliasi distrik bekerjasama secara erat dengan tim dukungan untuk korban dalam mempersiapkan dan membantu para korban pelanggaran hak asasi manusia yang berpartisipasi dalam audiensi.

79. Komisi juga menyadari bahwa, tanpa mengukur penderitaan masing-masing orang, pada saat ini sejumlah orang lebih membutuhkan bantuan dibandingkan yang lain karena berbagai pelanggaran yang mereka alami. Komisi merasa diharuskan oleh mandat dan prinsip-prinsipnya untuk mengembangkan program-program tertentu yang ditujukan untuk menangani kebutuhan-kebutuhan khusus ini.

Audiensi Publik

80. Audiensi Publik memberikan pengakuan dan pemulihan secara simbolis. Kerja ini diawali dengan pengambilan pernyataan dari korban oleh anggota tim distrik. Mendengarkan dengan baik dan merekam kisah mereka adalah langkah-langkah pertama dalam rangka membantu pemulihan. Beberapa *survivor* maju lebih jauh dengan menyampaikan kisah mereka pada audiensi publik. Di tingkat nasional, subdistrik dan desa, audiensi menempatkan para korban di tengah-tengah komunitas mereka. Masyarakat mendengarkan dan menghargai kisah mereka, mengakui penderitaan mereka, dan membantu mereka agar dapat merasa bahwa mereka diperhatikan dan beban mereka telah dibagi.

Lokakarya Pemulihan

81. Lokakarya Pemulihan melibatkan para korban dengan cara yang lebih mendalam serta menawarkan dukungan emosional dan psikologis. Lokakarya ini menjadi forum yang aman bagi para *survivor* untuk bertemu dengan korban lain yang telah mengalami penderitaan berat, untuk berbagi pengalaman dan mengurangi perasaan terisolasi yang dialami oleh begitu banyak korban. Lokakarya ini juga merupakan cara bagi Komisi untuk dapat mengenal korban lebih baik, serta belajar dari mereka mengenai berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan soal apa saja yang perlu dibantu.

Reparasi Mendesak

82. Reparasi Mendesak merupakan skema yang dikembangkan untuk menangani setidaknya beberapa kebutuhan mendesak korban. Komisi memahami bahwa hingga saat ini banyak korban yang terus menderita sebagai akibat dari pelanggaran berdampak melumpuhkan yang pernah mereka alami. Menerima reparasi merupakan hak dasar korban pelanggaran. Sebagai organisasi yang didirikan di atas prinsip-prinsip hak asasi manusia, Komisi memiliki tugas penting untuk membuat sejumlah kontribusi kecil untuk mewujudkan hak para korban ini. Terkadang kebutuhan yang harus ditangani itu bersifat fisik; terkadang, sifatnya psikologis, dan kadang pula bersifat ekonomis. Melalui Skema Reparasi Mendesak, Komisi memperoleh pelajaran yang memengaruhi pembahasan tentang Program Reparasi apa akan sesuai untuk keadaan Timor Leste. Program demikian akan dapat dibuat dengan memperhitungkan kebutuhan dan harapan masyarakat yang akan dibantu, serta dengan kemampuan sang pembuat program. Desain program reparasi ini menjadi bagian dari Bagian 11: Rekomendasi.

Profil Komunitas

83. Profil Komunitas merupakan catatan tentang pengalaman bersama komunitas desa atau kampung selama jangka waktu 25 tahun konflik politik. Tim-tim distrik melaksanakan lokakarya dan membantu masyarakat dalam membuat catatan permanen tentang kisah-kisah tersebut dengan bekerjasama dengan masyarakat dalam menuliskan kisah-kisah mereka dan menggambarkan sketsa peta yang menunjukkan lokasi berlangsungnya kejadian-kejadian penting. Proses ini mengakui baik kedalaman pengalaman kekerasan masyarakat maupun kekayaan tradisi lisan rakyat Timor. Pada awalnya lokakarya ini dirancang sebagai alat penelitian lokal dalam kerja pencarian kebenaran Komisi, tapi kemudian diakui sebagai kegiatan yang sangat berharga untuk mengembangkan pemahaman dan pemulihan komunitas.

84. Berbagai macam pendekatan ini memastikan bahwa Komisi melaksanakan program untuk mendukung para korban di seluruh wilayah negeri hingga sampai ke tingkat bawah, dan Komisi juga melaksanakan kegiatan secara nasional bertaraf tinggi serta kegiatan-kegiatan yang lebih intensif dengan jumlah korban yang lebih sedikit. Bagian ini akan menjelaskan secara lebih jelas berbagai macam aspek dari program komisi ini.

Audiensi Publik

85. Audiensi publik merupakan bagian penting dari pekerjaan Komisi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat subdistrik dan desa. Jenis-jenis audiensi yang berbeda mempunyai tujuan yang berbeda-beda pula, namun tujuan dasar dari semua jenis audiensi yang ada adalah untuk menciptakan proses demi menghormati dan membantu memulihkan martabat para korban pelanggaran hak asasi manusia.

86. Komisi telah menyelenggarakan delapan audiensi publik nasional. Audiensi yang pertama dengan tema khusus Audiensi Korban. Sedangkan tujuh audiensi berikutnya merupakan audiensi tematis yang membahas tema-tema besar pelanggaran hak asasi manusia yang tercakup dalam mandat Komisi, walaupun fokus utamanya adalah untuk mendengarkan kesaksian langsung dari para korban pelanggaran hak asasi manusia.

87. Tim-tim distrik menyelenggarakan audiensi publik di masing-masing subdistrik di penghujung program triwulan mereka. Audiensi-audiensi ini dikenal sebagai Audiensi Korban, yang berfokus pada sejumlah anggota komunitas terpilih yang telah memberikan kesaksiannya pada Komisi dengan menceritakan kisah-kisahnyanya kepada para Komisaris Regional, pemuka masyarakat, dan komunitasnya.

88. Audiensi Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK) dimaksud untuk membantu memperbaiki hubungan antarwarga di dalam suatu komunitas, sebagian dengan cara memulihkan martabat para korban. Audiensi-audiensi ini tidak dimulai dari para korban, tetapi oleh orang-orang yang telah merugikan komunitasnya. Secara teknis audiensi PRK ini tidak bergantung pada persetujuan seorang korban. Walau demikian, Komisi bermaksud menjadikan audiensi-audiensi ini sebagai proses yang mendorong pemulihan, baik pemulihan para korban maupun hubungan di dalam komunitas yang lebih luas.

89. Dalam beberapa audiensi PRK tidak terdapat korban individu, melainkan komunitas yang secara keseluruhan diidentifikasi sebagai korban oleh pelakunya. Jika ada korban individu, Komisi akan melibatkannya di dalam proses. Biasanya mereka akan duduk di depan para hadirin, di sebelah anggota panel yang memimpin sidang. Mereka mempunyai hak untuk menjawab atau bertanya kepada pelaku, dan panel terkadang akan bertanya kepada para korban, 'tindakan rekonsiliasi' apa yang layak dikenakan terhadap deponen. Dengan cara ini ada pengakuan sosial terhadap penderitaan yang dialami korban, dan juga perasaan berbesar hati oleh korban yang turut berperan dalam membantu reintegrasi mantan pelaku kembali ke masyarakat desanya.

90. Bagian 9 dari Laporan ini, tentang Rekonsiliasi Komunitas, membahas peran korban dalam audiensi rekonsiliasi komunitas dengan lebih terperinci. Bagian ini berfokus pada audiensi tingkat nasional dan subdistrik.

Tujuan audiensi publik

91. Audiensi publik nasional dan subdistrik menjadi bagian besar dari kerja Komisi. Audiensi-audiensi ini ditujukan untuk menumbuhkan pengakuan nasional mengenai kebenaran dari pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, serta dampaknya yang mendalam atas kehidupan seseorang, keluarga, komunitas, dan bangsa. Dengan menjadikan kesaksian pribadi para korban pelanggaran sebagai tonggaknyanya, pendidikan mengenai hak asasi manusia dan peningkatan kesadaran akan nilai-nilai hak asasi mengalir dari kekuatan kisah-kisah itu, menjangkau semua orang di Timor-Leste. Dari sejumlah kecil mantan korban yang bersaksi, orang-orang di seluruh penjuru negeri dapat mengenali pengalaman mereka atau keluarga mereka masing-masing.

92. Penggunaan media massa berperan penting demi keberhasilan audiensi nasional; televisi dan radio nasional menyiarkan secara langsung audiensi-audiensi ini hampir secara utuh ke berbagai penjuru negara, kemudian disiarkan ulang secara berkala. Hal ini memastikan bahwa para pengambil keputusan negara juga mendengarkan berbagai cerita dan pandangan para korban pelanggaran hak asasi manusia. Dengan memberi penghormatan dan pengakuan kepada para korban dalam audiensi-audiensi tersebut, Komisi bermaksud meningkatkan rasa pemulihan dan rekonsiliasi.

93. Audiensi publik bukanlah proses investigasi formal, dan tidak menuruti aturan hukum serta prosedur pengumpulan bukti. Tidak ada pengakuan dari pelaku, atau langkah untuk membawa pelaku dan korban saling berhadapan. Tujuan Audiensi Publik adalah untuk mengetengahkan dimensi kemanusiaan sepenuhnya dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste, dan memetik pelajaran dari berbagai faktor yang memengaruhi dan pola di balik pelanggaran-pelanggaran ini, serta membangun komitmen nasional terhadap ungkapan “jangan ada lagi.” Menceritakan kebenaran diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan semangat rekonsiliasi pribadi dan masyarakat.

Para korban yang dipilih untuk bersaksi

94. Orang-orang yang dipilih staf Komisi untuk bersaksi pada audiensi diambil dari para korban yang telah memberi pernyataan kepada tim pencari kebenaran tingkat distrik. Kriteria seleksi di antaranya adalah: apakah korban akan merasa nyaman berbicara di depan orang banyak; apakah mereka akan memetik manfaat dari pengalaman ini; apakah pernyataan mereka dapat dipercaya; apakah dengan menceritakan kisahnya akan membantu rekonsiliasi melalui pengakuan kebenaran; dan apakah mereka dapat mewakili yang lain yang juga memiliki cerita serupa akan tetapi tidak memiliki kesempatan bersaksi.

95. Tim pencari kebenaran Komisi tingkat distrik telah mengambil 7.824 pernyataan, dan sekitar 90% pemberi pernyataan mengatakan bersedia bersaksi di audiensi publik. Bagi sebagian besar orang, dirasa penting untuk menceritakan kisah mereka kepada komunitas dan di hadapan Komisi. Ini menjadi satu alasan mengapa format audiensi publik nasional dikembangkan untuk diselenggarakan di tingkat subdistrik.

96. Kisah Iria Moniz memperlihatkan pentingnya bagi banyak orang untuk memberikan pernyataan mereka serta menceritakan kisah mereka pada audiensi Komisi.

Dari desa terpencil ke audiensi publik

Bagi Iria Moniz kesempatan untuk berbagi pengalaman di audiensi publik bagaikan anugerah yang didapat melalui ketabahan dan komitmen. Ia menceritakan:

Pada mulanya saya tidak tahu bahwa program Komisi akan datang ke subdistrik dan desa kami, karena Kepala Desa kami tidak memberi tahu. Saya tinggal di desa terpencil yang sulit dijangkau oleh kendaraan mobil dan motor, karena memang tidak ada jalan. Inilah alasan kenapa kabarnya tidak sampai ke kami.

Jadi setelah Komisi pergi...saya sendiri yang pergi untuk mencari mereka di kantor Komisi di Maliana (Bobonaro) untuk memberi pernyataan...Saya merasa program mereka ini sangat penting karena saya banyak menderita selama perang...

Ketika saya pergi ke kantor Komisi di Maliana, mereka menyambut saya dengan baik dan mewawancarai saya. Saya tidak merasa takut untuk memberikan pernyataan saya kepada Komisi. Komisi juga memberi saya kesempatan untuk berbicara mengenai rasa sakit dan penderitaan saya di depan umum. Mereka tidak memaksa saya untuk ikutserta dalam Audiensi Publik Bobonaro. Saya (punya) mau sendiri, supaya dapat membagi beban yang selama bertahun-tahun telah saya pikul. Setelah itu saya merasa lebih lega.⁵

97. Pada audiensi publik di tingkat nasional maupun di subdistrik, Komisi melakukan seleksi para korban yang selamat (*survivor*) untuk mendapatkan wakil-wakil dari berbagai daerah, yang berbicara tentang kejadian dari periode yang berbeda-beda, dan melibatkan kelompok pelaku yang cukup mewakili. Juga diupayakan agar ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Ini merupakan hal yang penting agar komunitas dapat memahami bahwa Komisi adalah lembaga yang netral secara politik, yang memiliki mandat untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks konflik politik, tanpa memandang siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

98. Walaupun audiensi-audiensi ini tidak berusaha mempertemukan korban dan pelaku, selalu ada kemungkinan terjadi ketegangan di daerah setempat, terutama pada audiensi komunitas di tingkat subdistrik. Komisi tidak memiliki kapasitas perlindungan saksi, dan semata-mata mengandalkan aparat kepolisian subdistrik setempat untuk menjaga keamanan. Jika seseorang korban merasa kesaksiannya dapat membahayakan keselamatan pribadinya, Komisi akan menganjurkannya agar tidak memberi kesaksian di audiensi publik.

Audiensi publik nasional

99. Audiensi publik nasional pertama oleh Komisi diselenggarakan pada 11-12 November 2002, di auditorium bekas kompleks UNAMET dan CNRT di Balide, Dili. Tiga tahun sebelumnya, ribuan orang mencari perlindungan di kompleks ini, pada hari-hari yang penuh kekerasan menyusul Jajak Pendapat 1999. Tanggal itu sengaja dipilih agar bertepatan dengan peringatan 11 tahun pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991. Baik lokasi maupun tanggalnya memberi arti bahwa audiensi ini bertujuan memberi penghormatan kepada penderitaan para korban pelanggaran hak asasi manusia.

100. Audiensi ini dikenal dengan 'Audiensi Korban', dengan tema "Dengarlah Suara Kami" (atau *Rona Ami nia Lian* dalam bahasa Tetum). Enam perempuan dan delapan laki-laki dari ke-13 distrik di Timor-Leste memberi kesaksian mereka. Mereka dari rentang usia antara dua puluhan awal sampai enam puluhan lebih, dan menceritakan mengenai pelanggaran yang terjadi selama masa 24 tahun periode mandat Komisi. Mereka bercerita mengenai kekerasan yang terjadi selama masa konflik internal 1975 oleh partai-partai politik Timor-Leste, dan pelanggaran bertahun-tahun di bawah militer Indonesia dan kakitangannya.

101. Radio Timor-Leste dan Radio Rakambia menyiarkan audiensi ini secara langsung, dan audiensi inipun diliput oleh berbagai media massa mancanegara.

102. Audiensi melibatkan berbagai upacara adat Timor, paduan suara, puisi, dan pidato. Acara ditutup dengan misa dan prosesi ke perkuburan Santa Cruz; di sana, karangan bunga diletakkan untuk memperingati para korban pembantaian 1991 itu. Elemen budaya audiensi membantu menciptakan suasana yang mendukung bagi mereka yang bersaksi, serta untuk membedakan audiensi dari sidang pengadilan resmi. Pelibatan budaya Timor tradisional dan modern menjadi unsur penting dari semua audiensi Komisi.

103. Setelah diambil sumpahnya oleh para Komisaris Nasional, para *survivor* diberi kesempatan untuk menceritakan kisah mereka tanpa interupsi; terkadang, di akhir kesaksian, diajukan beberapa pertanyaan singkat oleh para Komisaris untuk memperoleh penjelasan. Ini menciptakan dinamika, di mana pemberi kesaksian tidak hanya berbicara kepada para Komisaris, tapi juga langsung kepada para hadirin dan pendengar radio dan pemirsa televisi. Kesempatan berbicara langsung kepada Komisi dan masyarakat luas merupakan bagian penting untuk menghormati martabat para mantan korban, dan menjadi bagian dari seluruh audiensi yang diselenggarakan Komisi.

Dengarlah Suara Kami - *Rona Ami nia Lian*

Audiensi publik nasional yang pertama oleh Komisi memperdengarkan enam perempuan dan delapan laki-laki korban pelanggaran berat hak asasi manusia dari seluruh distrik di Timor-Leste. Audiensi ini diadakan pada 11 dan 12 November 2002, untuk turut memperingati pembantaian Santa Cruz 1991 dan memberi penghormatan pada para korban kekejaman ini.

Teresinha da Silva dari Aileu, perempuan kecil yang sudah lanjut usia ini, berbicara mengenai pemukiman paksa penduduk sipil di kamp-kamp oleh Fretilin pada 1975, sebelum invasi Indonesia, dan kematian lebih daripada 20 anggota keluarganya akibat kelaparan yang terjadi setelah itu.

VN bercerita bagaimana dia disekap sebagai budak seks di markas militer Indonesia di Ermera, dari 1977 sampai 1978. Dia bercerita bahwa dia melahirkan dua orang anak, dan salah seorangnya sudah meninggal. Dia juga bercerita bagaimana dia dan anak laki-laknya masih terus dikucilkan oleh komunitasnya.

Atanasio da Costa berbicara mengenai serangan kejam oleh milisi di luar rumahnya di Oecussi pada April 1999. Setelah ditebas berulang kali dengan parang, dia akhirnya rebah, dan kemudian dihunjam duburnya dengan laras senapan. Atanasio da Costa memperagakan kembali adegan-adegan penyerangan ini, untuk menunjukkan bagaimana ia diserang ketika ia tergeletak tak berdaya di tanah, lalu membuka baju kausnya untuk memperlihatkan bekas-bekas luka dari penyerangan ini. Dia bercerita pada para Komisaris mengenai perawatan medis yang pernah diperoleh untuk menyembuhkan cedera yang dialaminya, termasuk sepuluh kali operasi, dan kelemahan kondisi fisik akibat dari serangan itu masih terus dirasakannya dalam kehidupannya sehari-hari.

Seorang perempuan muda dari Suai (Covalima) membuat para hadirin berlinang air mata dalam kesaksian terakhir audiensi ini. Ia perempuan muda yang penuh hargadiri. Ia menceritakan tentang pengalamannya setelah pembantaian penduduk sipil di Gereja Suai setelah Jajak Pendapat 1999. Ia dibawa ke sebuah gedung sekolah bersama beberapa perempuan lainnya, dan di sana ia diperkosa berulang kali di depan orang banyak selama seminggu. Dia kemudian dibawa ke Timor Barat, Indonesia, di mana kekerasan seksual ini berlanjut. Sebagai akibatnya ia melahirkan seorang anak. Dia bertanya pada hadirin apakah ia boleh memperlihatkan bayinya yang berumur satu tahun. Hadirin serentak menyahut, "Ya!" dan anaknya yang berumur satu tahun dibawa ke panggung oleh neneknya. Bayi itu diberi nama mengikuti nama seorang mantan Komisaris Tinggi PBB, yang pernah mengunjungi perempuan muda itu dan korban perempuan Suai lainnya pada 2000. Bayinya benar-benar merupakan lambang penyembuhan dan hak asasi manusia di Timor-Leste.

Di semua penjuru auditorium, orang-orang menangis dan berangkul. Cerita-cerita ini mengungkit kembali pengalaman traumatis mereka sendiri. Seorang perempuan muda yang dikelilingi teman-temannya yang menangis, teringat kembali pada peristiwa pembunuhan suaminya hanya selang satu hari setelah pernikahan

mereka di Agustus 1999. Seminggu setelah audiensi ini, Tim Komisi yang berkunjung ke desa di perbukitan di Nitibe di daerah kantong Oecussi, salah satu daerah paling terpencil di Timor-Leste, diberi cerita oleh orang-orang di sana bahwa mereka juga mendengarkan siaran langsung audiensi dan turut menangis ketika mendengar kesaksian-kesaksian itu.

Aniceto Guterres Lopes, Ketua Komisi, menyimpulkan tanggapan dari orang-orang yang hadir:

Anda semua telah menceritakan mengenai penderitaan Anda selama dua hari audiensi ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa Anda tidak sendiri. Melalui cerita-cerita Anda, Anda telah berbagi penderitaan dengan kami, dan sekarang kami semua turut merasakannya bersama Anda sekalian. Anda dapat melihat di sini hari ini, bagaimana kisah-kisah penderitaan Anda itu telah memengaruhi kita semua. Kami membuka hati kami semua untuk Anda.

Audiensi nasional tematis

104. Tujuh audiensi nasional yang lain memiliki karakter yang agak berbeda. Masing-masing memiliki fokus tematis yang didasarkan pada bidang-bidang pokok pembahasan dari penelitian pencarian kebenaran Komisi. Tema-tema itu ialah:

- Pemenjaraan politik (Februari 2003)
- Perempuan dan konflik (April 2003)
- Pemindahan paksa dan kelaparan (Juli 2003)
- Pembantaian massal (November 2003)
- Konflik Internal 1974-1976 (Desember 2003)
- Penentuan nasib sendiri dan masyarakat internasional (Maret 2004)
- Anak-anak dan konflik (Maret 2004)

105. Sebagian besar audiensi berlangsung selama dua hari, walaupun audiensi tentang pembantaian massal serta penentuan nasib sendiri dan komunitas internasional masing-masing berlangsung selama tiga hari, dan Konflik Internal 1974-1976 berlangsung selama empat hari.

106. Format audiensi tematis nasional didasarkan pada kesaksian orang-orang yang mengalami pelanggaran, yang berhubungan dengan tema yang menjadi pembahasan. Rata-rata 10 korban memberi kesaksian pada tiap audiensi. Komisi juga mendengarkan kesaksian dari para ahli dan submisi dari lembaga dan individu yang memiliki pengetahuan khusus mengenai tema yang sedang dibahas, baik akibat dari kerja mereka di Timor-Leste maupun melalui penelitian mereka tentang tema tersebut. Kesaksian ahli membantu Komisi dan hadirin untuk menempatkan kesaksian korban di dalam sebuah konteks, dan untuk memahami dengan lebih baik beberapa penyebab dan pola pelanggaran itu.

107. Dua dari audiensi itu memiliki format yang agak berbeda. Audiensi mengenai Konflik Internal 1974-1976 selain mendengarkan kesaksian dari empat korban pelanggaran selama periode tersebut, juga mendengar kesaksian dari orang-orang dan partai-partai yang memainkan peran sejarah penting pada kejadian-kejadian pada 1974-1976. Di antara para pembicara yang memainkan peran langsung pada kejadian-kejadian tersebut, dan dikenal sebagai ‘pelaku sejarah’ (*agentes do processo*) ialah Presiden Timor-Leste, Xanana Gusmão; Perdana Menteri Mari Alkatiri; Pemenang Nobel Perdamaian dan Menteri Luar Negeri, Dr. José Ramos-Horta; dan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin.

108. Audiensi pada Maret 2004 tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional tidak melibatkan kesaksian korban samasekali. Komisi mendengarkan submisi mengenai berbagai kebijakan pemerintah asing mengenai masalah Timor-Leste selama masa 1974-1999, juga mengenai aksi masyarakat sipil internasional tentang Timor-Leste selama periode ini. Juga didengarkan kesaksian mengenai peran orang-orang Timor-Leste di pengasingan.

109. Di dalam pandangan masyarakat umum, Audiensi Korban dan audiensi tematis nasional ini dalam banyak hal merupakan titik tertinggi pencapaian kerja Komisi. Dengan peliputan penuh oleh media, audiensi-audiensi ini disaksikan di seluruh penjuru negeri dan diberitakan oleh media internasional. Peliputan luas ini penting untuk memperluas pemahaman mengenai dukungan bagi korban serta pekerjaan Komisi. Suara para korban adalah hal utama yang didengar oleh masyarakat dalam dialog nasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Hal-hal penting dari audiensi nasional

110. Hal pokok dari audiensi-audiensi mencakup peresmian kantor nasional Komisi di bekas penjara politik Comarca di Balide. Kantor nasional dibuka dengan audiensi mengenai Pemencaraan Politik yang menyajikan kesaksian dari para mantan tahanan, termasuk beberapa orang yang pernah ditahan di Comarca. Audiensi tentang Perempuan dan Konflik memberi sekilas pandang mengenai hidup dan penderitaan para perempuan selama periode konflik. Audiensi yang diberi tajuk Pembantaian Massal mendengarkan kesaksian dari para korban tindakan-tindakan terkejam selama periode mandat Komisi, termasuk di antaranya tidak hanya Pembantaian Kraras, Pembantaian Santa Cruz 1991, dan Pembantaian Gereja Liquiçá, tetapi juga kejadian yang tidak begitu terkenal yang terjadi pada periode konflik internal partai politik, setelah invasi Indonesia ke Dili, dan selama akhir 1970-an dan awal 1980-an.

111. Audiensi Pemindahan Paksa dan Kelaparan membahas satu periode tragis dalam sejarah Timor-Leste. Kelaparan dan penyakit akibat perang telah membunuh puluhan ribu penduduk sipil selama 24 tahun periode mandat. Cerita mengenai pengepungan dan kampanye pengeboman terhadap penduduk sipil di gunung, kamp ‘konsentrasi’ bagi orang-orang yang menyerahkan diri di pulau penjara Ataúro, tidak pernah diulas secara publik sebelumnya.

112. Bagi banyak orang, audiensi pada Desember 2003 mengenai Konflik Politik Internal 1974-1976 akan menjadi momen yang paling dikenang dari kerja Komisi. Untuk pertama kalinya para pemimpin Timor-Leste berbicara di hadapan umum dan dalam forum resmi mengenai kekerasan antarsesama orang Timor-Leste pada 1974-1976. Ketidakpastian mengenai bagaimana para pemimpin politik akan bereaksi terhadap kesempatan ini mewarnai jalannya audiensi. Pada akhirnya, semangat kerendahan hati, tanggung jawab dan kesedihan yang mendalam, serta rekonsiliasi antara musuh-musuh politik lama menjadi momen unik dalam sejarah Timor-Leste.

113. Audiensi tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional memberi kesempatan langka bagi orang Timor-Leste untuk mengetahui tentang persepsi internasional yang lebih luas, serta pengaruhnya bagi perjuangan panjang mereka untuk penentuan nasib sendiri. Kesaksian dari teman-teman lama Timor-Leste seperti Pat Walsh, David Scott, dan James Dunn dari Australia; Arnold Kohen dari Amerika Serikat; Monica Nakamura dari Jepang; Luisa Teotonia Pereira dari Portugal; dan Francesc Vendrell dari PBB; mengingatkan kita semua bahwa bahkan di masa-masa kekerasan yang paling suram pun masih ada orang-orang di berbagai penjuru dunia yang berusaha membela hak orang Timor-Leste untuk penentuan nasib sendiri. Kesaksian Ian Martin, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal pada masa UNAMET, mengingatkan orang Timor-Leste betapa penderitaan mereka belum berakhir begitu masyarakat internasional mengakui tanggungjawabnya untuk mengizinkan rakyat Timor-Leste menggunakan hak kolektif mereka untuk menentukan nasib sendiri.

114. Partisipasi pembela hak asasi manusia dari Indonesia, seperti teman-teman baik para tahanan politik Timor-Leste, Ibu Ade Rostina Sitompul dan Luhut Pangaribuan, serta anggota dan staf Komnas Perempuan, Tim LSM Kemanusiaan Timor Barat, dan aktivis hak asasi manusia Yeni Rosa Damayanti dan Nugroho Katjasungkana merupakan simbol penting mengenai hubungan baru dengan Indonesia, yang didasari atas prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka juga mengingatkan kita bahwa ada warga negara Indonesia yang mengambil risiko besar untuk membela hak asasi manusia di Timor-Leste.

115. Audiensi terakhir tentang Anak-anak dan Konflik pantas menutup kerja Komisi yang ini, karena audiensi ini tidak hanya mengangkat penderitaan tragis yang dialami oleh para korban anak, tetapi juga menyampaikan ketahanan dan kekuatan generasi muda Timor-Leste.

116. Dampak dari audiensi publik ini di seluruh Timor-Leste merupakan perkembangan besar dalam kerja Komisi. Untuk meneruskan pelajaran yang didapat dari audiensi-audiensi ini, Komisi telah menerbitkan buku mengenai masing-masing audiensi. Dengan menyediakan catatan permanen bagi masyarakat Timor-Leste, Komisi mengharapkan bahwa pelajaran yang disampaikan oleh audiensi publik ini dapat tetap bergema.

Pidato pembukaan Uskup Basilio do Nascimento pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-1976

Mengapa kita berkumpul di sini hari ini? Karena saat bersejarah... karena luka-luka masa lalu, semua orang Timor sudah menunggu... supaya kita bisa rekonsiliasi. Rekonsiliasi demi penderitaan masa lalu, untuk Tanah Air kita. Semua orang Timor sudah menderita. Kita orang Timor harus melakukan rekonsiliasi dengan diri kita sendiri, dengan Tanah Air kita, dan dengan sejarah kita. Kita sadar ini merupakan suatu gagasan yang baik, akan tetapi ini sulit untuk dilakukan. Kita mendengar kata-kata pembenaran dan rasionalisasi: "Karena perang, saya melakukan ini dan itu"...Kita perlu memeriksa hal ini.

Tentang moralitas – rekonsiliasi di dalam diri sendiri hanya akan terjadi jika kita dapat melepaskan diri dari rasa sesal yang mendalam. Jika tidak, ada suara yang akan selalu menghantui kita, selalu menyeru-nyeru di kepala kita, di pikiran kita. Itulah mengapa saya katakan bahwa rekonsiliasi akan dapat dicapai jika kita dapat terlepas dari penyesalan yang mendalam. Kita dapat saja mengarang berbagai alasan dan argumentasi penerangan, tapi kalau kita tidak melakukan rekonsiliasi dengan diri sendiri, kita akan selalu terpecah-belah. Tidak hanya sebagai bangsa atau kelompok, tapi juga di dalam diri kita masing-masing seperti layaknya berkepribadian ganda: mulut kita berkata satu hal, tindakan kita melakukan sesuatu yang lain.

Kita tahu saudara-saudara kita yang sudah meninggal tidak akan pernah kembali, tapi kita perlu tahu keadaan tentang bagaimana mereka meninggal. Apa yang kita orang Timor maksudkan dengan keadilan adalah sesuatu yang khusus. Saya melihat bahwa orang Timor tidak menunggu sampai orang-orang yang berbuat salah dihukum. Begitu pula saat anak lelaki Bibi Maria dibunuh di pergunungan. Keadilan, bagi rakyat biasa Timor-Leste, meliputi pembersihan nama mereka dan memastikan bahwa orang tidak melupakan (para korban).

[Kutipan dari pidato 15 Desember 2003]

Audiensi korban subdistrik

117. Tim-tim distrik bekerja di masing-masing subdistrik dalam distriknya selama sekitar tiga bulan. Selama masa ini mereka mengambil pernyataan-pernyataan untuk pencarian kebenaran, memfasilitasi audiensi rekonsiliasi komunitas, melakukan lokakarya profil komunitas, dan memberi dukungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

118. Di akhir masa kerja tiga bulannya, tim menyelenggarakan audiensi publik di subdistrik tersebut, yaitu Audiensi Korban Subdistrik. Pejabat pemerintah sipil setempat, pemuka adat, dan masyarakat dari subdistrik dan distrik diundang untuk menghadiri audiensi tersebut bersama para Komisaris dan staf dari kantor nasional. Pada audiensi, tim distrik melaporkan kegiatannya selama tiga bulan sebelumnya kepada komunitas. Komunitas kemudian mendengarkan kesaksian dari para korban pelanggaran hak asasi manusia, yang dipilih dari anggota komunitas yang telah memberi pernyataan kepada tim distrik. Biasanya antara empat sampai enam korban memberi kesaksian.

119. Audiensi Korban Subdistrik diilhami oleh kuatnya pengaruh audiensi nasional, dan oleh harapan-harapan yang dinyatakan dari begitu banyak korban yang ingin bersaksi. Audiensi-audiensi ini merupakan pengingat bagi para korban yang tewas, pernyataan syukur dari anggota masyarakat yang selamat, dan komitmen mereka untuk menyembuhkan perpecahan masa lalu dengan semangat rekonsiliasi. Audiensi juga merupakan kesempatan untuk berbagi hasil kerja tiga bulan sebelumnya bersama komunitas, untuk menekankan kembali bahwa salah satu peran Komisi ialah membantu memulihkan martabat para korban dalam komunitas mereka; dan untuk menutup kegiatan Komisi di subdistrik dengan suatu perayaan.

120. Secara total, telah diselenggarakan 52 Audiensi Korban Subdistrik. Enam puluh lima perempuan dan 149 laki-laki memberi kesaksian, dan diperkirakan sekitar 6.500 anggota masyarakat telah ikut ambil bagian.

Audiensi Subdistrik: Natarbora

Natarbora adalah sebuah subdistrik terpencil di pedalaman tenggara Distrik Manatuto. Tim distrik Komisi untuk Manatuto bekerja di subdistrik ini mulai Februari sampai Mei 2003. Audiensi subdistrik untuk menandai penutupan partisipasi komunitas dalam kegiatan-kegiatan Komisi diadakan pada 12 Mei 2003 dan dihadiri oleh sejumlah besar warga masyarakat.

Pada audiensi ini tiga orang korban pelanggaran hak asasi manusia bersaksi di depan Komisi dan komunitas mereka. Kesaksian mereka adalah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahap penting konflik, yaitu antara 1975 - 1999.

Senhora Filomena (nama keluarga dirahasiakan) berbicara tentang pengalamannya sebagai anggota organisasi perempuan OPMT, antara 1975 - 1979, yang membantu prajurit-prajurit Falintil. Ia berbicara tentang penangkapannya pada 1980, sesudah salah seorang anggota keluarganya menceritakan kepada tentara tentang kegiatannya. Ia mengatakan bahwa sekarang ia tinggal di Indonesia. Senhora Filomena menceritakan bagaimana penyiksaan yang dialaminya selama pemeriksaan oleh tentara Indonesia. Selanjutnya ia ceritakan bahwa

pada 1999 kios miliknya dibakar habis oleh tentara Indonesia, dengan bantuan orang-orang Timor-Leste, termasuk pejabat pemerintah subdistrik. Ia juga mengatakan, seandainya mereka itu akan kembali ke masyarakat, ia akan bersedia menerima mereka kembali.

WN bercerita tentang peristiwa tragis yang menimpa keluarganya dalam 1977 - 1978. Diceritakannya, sesudah ayahnya menyerah kepada tentara Indonesia, anggota-anggota Falintil datang dan memerkosa bibinya, yang ketika itu masih muda dan belum bersuami. Ia mengatakan, mereka mengancam akan membunuhnya jika ia hendak menghalangi pemerkosaan terhadap bibinya itu. Kemudian diceritakannya, tidak lama sesudah kejadian itu, ibunya dan kelima adiknya serta bibinya tersebut dibunuh oleh tentara Indonesia di dekat laut.

João Graciano menceritakan pengalamannya di penjara sesudah ia menyerah pada tentara pada 1982 di Soibada. Ia, ayahnya, adik laki-lakinya, dan tujuh penduduk sipil dipenjarakan selama enam minggu. Di sana, katanya, mereka hampir tidak pernah diberi makan. Sesudah dilepas, ia dan adik laki-lakinya diambil oleh tentara Indonesia dan dijadikan TBO (Tenaga Bantuan Operasi). Mereka berdua dipaksa bekerja sebagai TBO di hutan dekat Barique selama empat bulan. Tentara itu kemudian memerintahkan anggota Hansip Timor untuk menawan mereka di Soibada. Selama dalam tahanan mereka berdua dipukuli habis-habisan oleh lebih daripada sepuluh tentara dan anggota Hansip, sehingga adiknya menderita cacat fisik sampai sekarang.

Audiensi merupakan proses untuk menghormati pengalaman individu yang telah menderita selama mandat Komisi, juga untuk menceritakan dan menghormati masyarakat luas di wilayah Natarbora selama tahun-tahun itu, dan untuk mengenang mereka yang telah tewas. Audiensi direkam dan disiarkan oleh program radio Komisi setiap minggu, dan melalui wahana ini pengalaman warga masyarakat dari daerah terpencil bisa dibagikan pada masyarakat di seluruh Timor-Leste.

Dampak keikutsertaan terhadap Korban

121. Komisi melakukan evaluasi terhadap tanggapan peserta dalam Audiensi Korban Subdistrik antara Januari dan Maret 2004. Bagian ini juga mencakup tanggapan yang diberikan oleh orang-orang Timor-Leste, sesuai yang didokumentasikan dalam survei.⁶ Karena keikutsertaan dalam audiensi ini bersifat sukarela, tidaklah mengejutkan bila para korban melaporkan pengalaman yang positif tentang audiensi ini.

122. Carlos Vitorino yang berusia 70 tahun mengungkapkan perasaan yang juga dirasakan oleh peserta lainnya ketika ia mengatakan:

Saya merasa bahagia karena orang-orang di Viqueque dan orang-orang penting di Dili datang untuk mendengarkan sendiri kata-kata kita...Saya merasa sungguh puas.

123. Domingas Piedade ikutserta dalam Audiensi Korban di Subdistrik Quelicai. Ia menekankan arti penting pengakuan terhadap penderitaan yang dialami olehnya dan orang-orang lain untuk pemulihan:

Saya merasa bahagia karena saya mendapat kesempatan untuk berbicara...semua hal dalam audiensi ini sungguh baik, karena telah menyembuhkan kesusahan kami.

124. Teófilo da Costa Barros dari Lolotoe (Bobonaro) mengatakan bahwa bebannya telah terangkat oleh audiensi:

Setelah saya bersaksi di audiensi publik, saya merasa lega karena saya dapat membuang beban emosional saya. Beban ini telah terbuang, dan sekarang saya sudah tidak risau lagi. Saya juga telah membebaskan diri dari rasa benci terhadap orang-orang yang telah melukai saya di masa lalu. Sekarang saya akan selalu menerima mereka dengan tangan terbuka.

125. Sama halnya dengan Tito Soares de Araújo dari Subdistrik Cailaco (Bobonaro) yang mengatakan betapa ia merasa senang dengan audiensi.

Saya merasa bahwa audiensi ini luarbiasa, sangat bagus...sekarang saya merasa ringan dan bahagia, karena beban di hati telah saya tumpahkan.

126. Lourença da Cunha Moniz dari Subdistrik Maliana (Bobonaro) merasa puas karena ia telah bisa berbuat sesuatu bagi generasi mendatang dengan menceritakan apa yang pernah terjadi padanya.

Saya tidak menyimpan hal-hal buruk yang terjadi pada saya di dalam hati. Saya akan menceritakannya agar dapat dicatat dalam sejarah untuk anak cucu kita.

127. Banyak korban berbicara mengenai arti penting audiensi ini bagi hubungan keluarga dan komunitas mereka. Biasanya, keluarga dan teman-teman akan membantu korban dengan memberikan apa yang mereka perlukan sebelum, selama, dan sesudah audiensi. Florentina Gama, yang bersaksi dalam audiensi Balibo (Bobonaro), mengatakan bahwa banyak anggota keluarga dan komunitasnya berhipun mendukungnya. Dia mengatakan:

Ketika saya ambil bagian dalam audiensi, banyak keluarga saya yang mendukung keinginan saya untuk bicara di depan umum. Mereka tidak berkeberatan. Mereka berterimakasih bahwa saya dapat

bercerita mengenai penderitaan yang saya alami selama hidup, dan bahwa para pemimpin dapat mendengarkannya dan menaruh peduli pada kami...Setelah saya memberi kesaksian dalam audiensi publik, tetangga dan keluarga tidak ada yang kecewa. Mereka merasa senang karena saya telah mewakili korban-korban lain dari kota saya dan menceritakan penderitaan yang telah dialami oleh setiap keluarga.

128. Tanggapan keluarga Lourença da Cunha Moniz, dari Subdistrik Maliana (Bobonaro), pada awalnya mengejutkan, karena mereka sebelumnya belum pernah mendengarkan cerita Lorença. Pada audiensi itu, keluarga Lourença menangis bersama dia:

Ketika saya bersaksi di audiensi, keluarga saya terkejut, karena saya telah merahasiakan cerita saya dari mereka. Baru setelah Komisi datang, saya bagi rasa sakit dan derita saya di muka umum dan di hadapan para pejabat setempat...Ketika saya bersaksi di audiensi publik itu, keluarga dan teman-teman saya juga turut sedih dan menangis mendengar penderitaan yang saya alami...

129. Tetapi yang lainnya menerima reaksi yang berbeda-beda dari keluarga dan komunitasnya. Keputusan Teofilo da Costa Barros di Lolotoe (Bobonaro) untuk mengikuti audiensi disambut dengan diam dan tak acuh oleh keluarga dan tetangga, walaupun mereka tidak terang-terangan menentang:

Ketika saya pergi ke audiensi, tidak seorang pun dari keluarga saya yang mendukung. Mereka tidak mengucapkan kata sepatah pun. Sesudah saya memberi kesaksian, saya pulang, dan keluarga serta tetangga tidak ada yang mengancam atau marah pada saya.

130. Di Subdistrik Bobonaro (Bobonaro), Iria Moniz, bekas pemimpin klandestin di desanya, mengatakan bahwa pada awalnya keluarganya menuduh ia telah mengkhianati Xanana Gusmão dengan memberi kesaksian di audiensi. Tapi setelah audiensi:

Banyak orang yang merasa sedih dan beberapa datang dan memeluk saya dan menangis, karena cerita saya membuat hati mereka merasa pilu.

131. Pengalaman Irina Moniz membukakan kenyataan bahwa bicara tentang kekerasan yang terjadi antara sesama orang Timor masih merupakan masalah peka, meskipun yang dibicarakan adalah tentang peristiwa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tekanan untuk tetap diam bisa sangat kuat, sehingga dapat berakibat terus mengucilkan korban dalam penderitaannya. Kenyataan seperti ini perlu selalu diperhatikan saat mempertimbangkan program-program di masa depan dalam membangun rekonsiliasi di tingkat komunitas.

Dampak dari audiensi publik

132. Audiensi korban merupakan pengalaman bangsa bersama-sama untuk mendengarkan suara korban dan menghadapi kebenaran serta akibat pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Audiensi-audiensi ini menjadi dasar untuk dialog lebih lanjut di tingkat nasional dan komunitas, tentang bagaimana menghadapi pelanggaran di masa lalu dalam semangat rekonsiliasi. Audiensi Subdistrik khususnya menjadi sangat penting dalam membawa proses ini keluar kota Dili dan masuk ke komunitas-komunitas lokal.

133. Audiensi nasional merupakan pengalaman baru bagi korban dan bangsa. Sebagian besar korban berasal dari perdesaan dan tidak pernah mendapat kesempatan berbicara pada suatu acara resmi apapun. Melalui tayangan televisi Dili dan siaran radio ke seluruh penjuru negeri, suara korban mencapai komunitas dan keluarga di seluruh Timor-Leste. Audiensi memberi mereka kesempatan istimewa untuk berbicara secara langsung kepada para pemimpin nasional ketika para Komisaris Nasional bertanya apakah ada pesan dari para korban yang hendak disampaikan kepada bangsa. Dengan demikian, audiensi telah menempatkan orang-orang awam di tengah-tengah perdebatan bangsa tentang penyembuhan, rekonsiliasi, dan keadilan.

134. Komisi telah mengangkat isu-isu yang sensitif pada audiensi publik, khususnya pada audiensi nasional. Untuk pertama kalinya, masyarakat mendengar kesaksian langsung mengenai pelanggaran-pelanggaran kejam yang dilakukan oleh partai politik Timor-Leste pada 1974-1976. Korban juga bercerita mengenai kekerasan yang dilakukan oleh orang Timor-Leste yang ada di dalam militer Indonesia atau sebagai kakitangannya. Dimensi keluarga dan komunitas dari kekerasan semacam ini sangat mendalam. Para perempuan berbicara dengan terusterang tentang kekerasan seksual yang mereka alami, melawan pendapat umum yang mengatakan bahwa budaya Timor melarang membicarakan soal-soal seperti ini. Audiensi mengingatkan akan dimensi pribadi dari pelanggaran yang hebat dan lama oleh tentara Indonesia selama masa mandat Komisi. Proses kerja penuturan kebenaran di depan publik ini dipuji oleh masyarakat luas karena memberi arah baik bagi prakarsa membangun perdamaian di masa depan.

135. Komisi menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam pada para korban yang sudah dengan berani menyumbang kepada proses dialog dan pendidikan komunitas ini. Kami berharap agar orang-orang yang telah berpartisipasi dalam proses ini dapat merasakan bahwa dengan ini mereka telah terbantu dalam perjalanan penyembuhan mereka.

Lokakarya Pemulihan

Latar belakang

136. Program Lokakarya Pemulihan muncul dari pengalaman komisi bekerja dengan para korban dalam tiga audiensi publik nasional yang pertama. Tim-tim distrik yang bekerja di desa-desa menjadi sadar bagaimana kekerasan di masa lalu masih memengaruhi kehidupan para korban. Mereka melihat bahwa beberapa

korban memerlukan lebih daripada sekadar dukungan yang ditawarkan melalui pengambilan pernyataan dan kunjungan-kunjungan lanjutan yang singkat. Sebelum diadakannya setiap audiensi publik nasional, Komisi mengadakan lokakarya dengan para peserta untuk membantu mempersiapkan mereka secara emosional dalam menghadapi pengalaman berbagi kisah mereka di hadapan umum. Lokakarya ini didukung oleh LSM Fokupers.

137. Dengan mempertimbangkan berbagai pengalaman tersebut sebagai langkah awal, Komisi melaksanakan evaluasi atas kerjanya pada Mei 2003. Komisi membahas cara yang ditempuhnya dalam memberi dukungan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, dan memutuskan mencoba memberikan dukungan yang lebih intensif guna membangun kembali kehidupan para korban. Program Lokakarya Pemulihan kemudian dibuat oleh Tim Dukungan pada Korban.

138. Model lokakarya ini menuntut kerja intensif bersama para korban, dan jelas bahwa lokakarya itu hanya akan menjangkau sejumlah kecil peserta. Oleh karenanya, kriteria untuk partisipasi kemudian dibuat, yaitu sebagian besar dengan memperhatikan tingkat kerentanan korban dan penilaian staf Komisi distrik bahwa mereka akan diuntungkan oleh proses semacam itu.

139. Karena Komisi tidak memiliki ahli kesehatan jiwa yang terlatih secara profesional, Komisi bekerjasama dengan Fokupers. Sejumlah organisasi dan perorangan lain juga memberikan kontribusi mereka terhadap pelaksanaan lokakarya, termasuk kelompok seni yang berbasis di Dili Arte Moris, suster-suster Canossian di Balide yang menyediakan akomodasi, para musikus Timor, dan Organisasi Migrasi Internasional (IOM, International Organization of Migration), yang membantu dengan transportasi. Staf Dukungan untuk Korban tingkat distrik dan nasional berperan penting dalam memfasilitasi proses tersebut dan memberikan dukungan kepada para peserta.

Maksud dan tujuan

140. Lokakarya pemulihan mempunyai empat maksud dan tujuan utama, semuanya terkait dengan pengembangan hubungan yang lebih erat antara Komisi dengan para korban berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Maksud dan tujuan utamanya adalah untuk:

- memberi lebih banyak dukungan bagi para korban sesuai dengan kemampuan Komisi
- mengacu para *survivor* kepada layanan dan organisasi lain yang bisa memberi bantuan
- menolong para korban dalam perencanaan penggunaan dana bantuan Reparasi Mendesak, dan
- mendengarkan pandangan-pandangan para korban mengenai apa yang perlu direkomendasikan oleh Komisi untuk tindakan selanjutnya dalam Laporan Akhir

141. Termasuk dalam maksud dan tujuan tersebut, Lokakarya pemulihan secara khusus bertujuan untuk:

- Menciptakan tempat yang aman bagi para korban pelanggaran berat hak asasi manusia berat, untuk berkumpul dan bercerita mengenai pengalaman dan kehidupan mereka saat ini.
- Memberi kesempatan para *survivor* untuk saling berbagi cerita.
- Memberi kesempatan para *survivor* untuk berpartisipasi dalam kerja kelompok dan berbagai kegiatan kreatif untuk membantu dalam pemulihan.
- Menciptakan proses yang memberi kesempatan para korban untuk mengeksplorasi beraneka macam bentuk emosi, termasuk kesenangan, tawa dan, pujian terhadap kekuatan korban baik secara perorangan maupun komunitas.
- Membantu para *survivor* dalam merencanakan penggunaan dana yang diberikan melalui program Reparasi Mendesak.
- Mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan mengirim para *survivor* kepada organisasi lain untuk memperoleh bantuan.
- Membuat dan mencatat berbagai rekomendasi konkret dari para korban, untuk membantu Komisi dalam menyelesaikan laporan akhir, dengan cara yang mencerminkan berbagai pengalaman dan pemikiran-pemikiran mereka.

Lokakarya Pemulihan: bantuan yang lebih mendalam

Maksud dan tujuan Lokakarya Pemulihan sederhana saja dan diupayakan realistis. Kami berusaha menangani berbagai kebutuhan para peserta di berbagai tingkatan. Lokakarya tiga hari tidak akan pernah menjadi awal dan akhir dari suatu proses pemulihan, terutama karena setiap peserta yang hadir berada pada tahapan proses penyembuhan yang berbeda. Dalam proses kelompok, dengan mencakup jenis-jenis kegiatan yang beragam, kami berusaha menciptakan berbagai cara untuk berefleksi dan berinteraksi, yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang berbeda-beda untuk menemukan cara yang sesuai bagi mereka.

Adalah penting untuk menciptakan sebuah ruang di mana para korban merasa diperhatikan dan dihormati, dan di mana mereka pada saat yang sama bisa memberi perhatian dan penghormatan kepada rekan sesama korban. Menjalin hubungan dengan sesama yang menderita merupakan bagian penting dari program yang ditawarkan Komisi. Hal ini membantu para korban merasa

tidak terkucil dan menyadari bahwa mereka tidak sendiri dalam menanggung beban berat. Hal itu juga membantu menunjukkan bahwa beberapa pemulihan bukanlah sekadar menyangkut keahlian khusus para dokter, tapi tentang bagaimana menyentuh ke dalam lubuk hati diri sendiri dan tentang bagaimana saling mendukung.

Juga penting untuk menangani berbagai kendala yang bersifat material bagi kesejahteraan hidup para korban, dan karena itu Komisi berupaya menghubungkan korban dengan institusi-institusi yang menawarkan layanan pengobatan yang layak dan layanan-layanan yang lain. Bagi sejumlah orang yang menghadiri lokakarya tersebut, lokakarya ini tidak bermakna apa-apa selain sebuah kunjungan ke dokter. Bagi yang lain, menghadiri lokakarya ini, bisa berarti intervensi medis yang rumit dan drastis seperti pemasangan anggota badan palsu di Indonesia.

Bantuan terhadap masalah-masalah kesehatan fisik dan pengaturan bagi lingkungan yang aman, yang mendorong rasa saling percaya dan rasa berbagi, membentuk landasan untuk mencapai tujuan utama Lokakarya Pemulihan, antara lain untuk menolong para survivor mengetahui bahwa pemulihan dari dalam adalah proses yang membutuhkan perhatian dan tenaga, untuk mengidentifikasi dalam tahapan mana mereka berada dalam proses pemulihan, dan untuk mengambil beberapa langkah maju dalam proses tersebut. [Kieran Dwyer, Penasihat CAVR]

Peserta

142. Enam lokakarya diadakan di kantor nasional Komisi di Dili. Lima diperuntukkan bagi kelompok campuran laki-laki dan perempuan, dan satu khusus untuk peserta perempuan. Para peserta datang dari semua distrik di Timor-Leste, dan berbagai upaya dilakukan untuk melibatkan para korban dari sejumlah daerah yang paling terpencil di negara Timor-Leste.

143. Seluruh peserta sebelumnya telah memberikan pernyataan mereka kepada tim distrik pencarian kebenaran Komisi ini. Selain itu tim distrik untuk dukungan bagi korban telah mengidentifikasi bahwa para peserta tersebut memenuhi kriteria untuk Skema Reparasi Mendesak. Walau hanya sedikit jumlah penerima Skema Reparasi Mendesak yang berpartisipasi dalam lokakarya pemulihan, namun lokakarya ini merupakan bagian dari Skema tersebut.

144. Keseluruhannya, ada 156 orang berpartisipasi dalam enam lokakarya; 82 perempuan (52%) dan 74 laki-laki (47%).

Program lokakarya

145. Langkah pertama dalam lokakarya bagi kebanyakan peserta adalah perjalanan ke Dili. Banyak peserta yang berasal dari komunitas daerah terpencil belum pernah berkunjung ke ibukota negara, sehingga perjalanan ke Dili dan berada jauh dari keluarga serta komunitasnya merupakan langkah besar. Bantuan dalam tahap ini dan dalam setiap langkah proses tersebut merupakan bagian penting dari lokakarya. Tim-tim distrik Komisi bertanggung jawab atas pengaturan perjalanan dan membantu para peserta selama proses tersebut.

146. Para peserta lokakarya pertama yang berasal dari luar Dili tinggal di sekolah pelatihan guru, berlokasi di bekas kompleks UNAMET. Para peserta lokakarya berikutnya tinggal di Kesusteran Canossian di Balide, dekat kantor Komisi. Pelayanan sehari-hari yang diberikan oleh para Suster di Kesusterannya merupakan sumbangan yang sangat berharga. Para peserta biasanya tiba di Dili sehari sebelum lokakarya berlangsung. Pengaturan praktis ini penting dalam mengembangkan perasaan di antara para peserta bahwa mereka diperhatikan dan dihargai.

147. Membawa peserta ke Dili merupakan keputusan yang disengaja. Hal ini memungkinkan para peserta untuk sementara waktu keluar dari kehidupan sehari-harinya, dan mengkhususkan waktu sehari-hari hanya untuk diri mereka sendiri. Bagi kebanyakan peserta, khususnya para peserta perempuan, bebas dari rutinitas kerja rumahtangga sehari-hari yang melelahkan merupakan kesempatan langka. Selain itu, dengan membawa mereka jauh dari desa masing-masing, diharapkan mereka bisa berbicara lebih bebas mengenai berbagai pengalaman dan perasaan mereka. Lokakarya ini juga memungkinkan orang-orang dari seluruh daerah untuk saling bertemu, dan lokakarya ini mungkin mengurangi keterkucilan yang dirasakan oleh kebanyakan korban dengan menawarkan rasa dukungan terhadap rekan sesama korban.

148. Lokakarya berlangsung selama tiga hari. Program ini dilaksanakan dengan memadukan kegiatan formal dan informal. Setiap kelompok peserta berbeda, dan setiap individu dalam masing-masing kelompok pun menanggapi pengalaman ini dengan cara yang berbeda-beda. Dengan demikian, penting bagi lokakarya ini untuk bersikap fleksibel. Perpaduan antara kegiatan terstruktur dan informal memungkinkan peserta untuk berbaur dengan cara mereka sendiri-sendiri, untuk berbicara bebas satu sama lain dan saling memberikan dukungan.

149. Sebagian besar kegiatan lokakarya bertempat di kantor nasional Komisi, bekas penjara politik di Balide. Lokakarya ini membawa para korban ke pusat kerja sehari-hari Komisi, menciptakan rasa keterlibatan dalam dan rasa memiliki pada Komisi. Setiap kali lokakarya berlangsung, bekas penjara yang menjadi kantor nasional berubah dengan kehadiran para korban. Mereka membuat masalah pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu yang personal, dan memberi inspirasi dengan ketabahan mereka serta dukungan mereka bagi satu sama lain.

Hari pertama

150. Lokakarya diawali dengan sambutan seorang Komisaris Nasional, biasanya Komisaris Isabel Guterres, yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk kerja dukungan pada korban. Sesi pertama berfokus pada perkenalan, dan dengan perlahan-lahan menciptakan rasa nyaman di antara anggota kelompok, kemudian disusul dengan menjelaskan secara ringkas program tiga hari lokakarya kepada para peserta.

151. Staf Komisi kemudian menjelaskan apa yang dimaksud sebagai perjalanan pemulihan. Penjelasan ini membantu para peserta memahami bahwa pemulihan merupakan suatu proses yang dapat mereka mulai dan jalani sendiri. Ini memberikan kerangka kerja untuk kegiatan dan acuan untuk pembahasan selama tiga hari lokakarya tersebut.

152. Kegiatan utama pada hari pertama adalah menceritakan kisah masing-masing. Ini disebut sebagai 'konseling kelompok'. Sesi ini difasilitasi oleh para penasihat perempuan dari Fokupers, dengan bantuan dari staf Komisi. Fokupers memiliki lebih banyak pengalaman bekerja dengan para korban kekerasan, dan sumbangan mereka sangat penting bagi efektifnya lokakarya. Para penasihat itu kemudian bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, menggunakan teknik-teknik kreatif untuk membantu para korban menemukan cara berbicara mengenai pengalaman mereka. Tetapi, tidak ada kewajiban berbicara dan jika ada peserta yang memilih berbicara, ia dapat bercerita sebanyak atau sesedikit yang ia mau. Mendengarkan, sebagai bagian yang penting dari sesi ini, berarti menciptakan rasa hormat dan peduli pada sesama korban.

153. Sesi ini secara emosi melelahkan bagi peserta maupun pekerja. Dampak atas setiap peserta selalu dipantau, dan dukungan ekstra segera diberikan apabila perlu.

Perjalanan pemulihan

Pada hari sebelum lokakarya pemulihan yang pertama, Komisi beruntung dengan adanya kunjungan dari pastor Anglikan Selandia Baru, Pastor Michael Lapsley. Pastor Lapsley seorang aktivis hak asasi manusia di Afrika Selatan. Pada masa menjelang berakhirnya rezim apartheid ia selamat dari bom surat yang dialamatkan kepadanya, tapi kehilangan dua tangan dan satu matanya menjadi buta, dan harus menjalani operasi yang ekstensif dan rehabilitasi. Ia datang pertama kali ke Timor-Leste pada 1999 untuk memantau pemilu UNAMET, setelah sebelumnya bertemu dengan Xanana Gusmão di penjara Cipinang (Jakarta, Indonesia). Ia belajar mengenai penderitaan panjang rakyat Timor.

Di Afrika Selatan, pada masa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC), Pastor Lapsley menyadari bahwa para korban yang selamat dari

berbagai pelanggaran hak asasi manusia memerlukan lebih daripada sekadar dukungan jangka pendek, seperti yang bisa ditawarkan oleh TRC. Ia mendirikan Institut Pemulihan Memori (Institute for the Healing of Memory) untuk meneruskan kerja pemulihannya di Afrika Selatan. Pastor Lapsley membagi kisah pengalamannya dengan Komisaris Nasional dan staf Komisi, kemudian kisah dan kinerjanya menjadi inspirasi bagi pekerjaan Komisi.

Gagasan Pastor Lapsley tentang perjalanan pemulihan dipraktikkan oleh Komisi dan membantu dalam mendukung jalannya lokakarya Komisi. Pastor Lapsley bercerita tentang empat tahap tentang pengalaman korban:

- Pertama, masa dalam kehidupan seseorang sebelum pelanggaran terjadi, yang melibatkan keluarga dan sanak-saudara lainnya yang mendukung orang yang bersangkutan.
- Kemudian, masa ketika pelanggaran terjadi, yang sering melibatkan banyak tindakan dalam waktu lama, dan mengakibatkan hancurnya dasar kehidupan seseorang. Banyak orang yang tidak bisa bertahan dalam masa ini, dan mereka inilah yang disebut sebagai korban.
- Ketiga, mereka yang bisa bertahan hidup, yaitu yang disebut *survivor*. Tapi, sering kehidupan mereka terhenti, selalu teringat tentang kepedihan dan penderitaan dari pelanggaran. Banyak *survivor* yang selama hidup masih tetap dan terus-menerus merasakan kepedihan itu.
- Akhirnya, merupakan kerja seumur hidup bagi para *survivor* untuk beralih dari seorang korban menjadi seorang pemenang atas kepedihan dan kekerasan.

Empat tahap ini dijadikan dasar untuk membuat kerangka kerja kegiatan dan diskusi di dalam lokakarya pemulihan.

Banyak karya seni dari para korban yang mencerminkan tema dasar perjalanan pemulihan. Marcelina Poto membuat dua buah gambar dalam lokakarya yang diikutinya. Mengenai gambar tersebut ia berkata, “Saya menggambar rumah ini karena di depan rumah ini mereka membunuh suami.” Tentang gambar yang kedua ia menjelaskan, “Bunga in melambangkan keinginan saya untuk keluar dari penderitaan ini.”

Regina Freitas menjelaskan tentang tiga buah gambar yang ia buat:

Rumah ini melambangkan masa sewaktu keluarga saya masih lengkap. Pohonnya melambangkan hidup saya. Pohon yang tidak berdaun melambangkan saat mereka membunuh suami saya, dan senjata melambangkan persenjataan yang digunakan tentara Indonesia untuk membunuhnya.

Marta Ximenes memperlihatkan dua gambar yang ia buat:

Rumah dengan tamannya melambangkan saat mereka membunuh suami saya di rumah ini dan menembak kaki saya. Bunga-bunga ini melambangkan kebahagiaan yang saya rasakan, karena saya telah membagi penderitaan saya dengan yang berwenang.

Kesempatan membangun kesepahaman

Berbagi cerita tentang pelanggaran di masa lalu merupakan pengalaman yang sulit bagi para peserta. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan dukungan dari rekan-rekan sesama peserta merupakan bagian penting dari proses tersebut. Terkadang dalam kesempatan ini terangkat pertanyaan-pertanyaan sensitif bagi para peserta, dan lokakarya menjadi forum untuk membahas masalah-masalah yang sulit.

Pada lokakarya Maret 2004, satu kelompok kecil membagi kisah mereka. Seorang perempuan muda dari Suai (Covalima) menceritakan kisah pedih pemerkosaan terhadapnya oleh militer Indonesia pada 1999. Kelompok tersebut mendengarkan dengan penuh perhatian ketika perempuan muda itu menceritakan kisahnya sambil menangis. Seorang pemuda menyela, dengan sopan, mengatakan bahwa menurutnya dalam budaya Timor tidak pantas perempuan bercerita tentang pengalaman semacam itu. Ia sendiri adalah *survivor* dari penyiksaan hebat berkali-kali sepanjang 1990-an.

Fasilitator kemudian bertanya pada perempuan muda dan kelompok kecil itu, bagaimana menurut pendapat mereka. Seorang perempuan paruh baya yang duduk di antara pemuda dan perempuan muda tersebut, dengan satu tangan di pundak si perempuan muda mengatakan bahwa banyak orang perempuan telah diperlakukan buruk di masa lalu. Maka, jika sekarang mereka ingin berbicara mengenai hal itu, tidak ada sesuatu pun dalam budaya Timor yang mengatakan mereka tidak boleh melakukannya. Ia bahkan mengatakan, sekaranglah saat yang tepat bagi kaum perempuan untuk berbicara. Ia mengatakan hal itu dengan lemah-lembut, sambil menenangkan juga si pemuda dengan menepuk-nepuk pundaknya. Ia sendiri pun salah seorang korban perkosaan. Kelompok kecil dan pemuda itu mengangguk setuju, dan perempuan muda tersebut melanjutkan ceritanya.

Hari kedua

154. Kegiatan pada hari kedua dan ketiga sengaja dirancang untuk memberikan imbalan pada kisah-kisah yang diceritakan pada hari pertama, yaitu dengan membiarkan para peserta menyatakan kisah dan perasaan mereka dengan cara lain, dan juga untuk mengalami emosi-emosi lain seperti kegembiraan dan puji-pujian.

155. Kegiatan hari kedua meliputi cara-cara kreatif untuk mengekspresikan perasaan, yang berlangsung dalam suasana santai dan menyenangkan. Menyanyi, permainan drama, dan menggambar serta melukis merupakan kegiatan utama. Fokusnya sedikit bergeser dari pengalaman masa lampau ke kehidupan yang dijalani para *survivor* saat ini, dan apa harapan mereka untuk masa depan. Kelompok seni pemuda Arte Moris ikut hadir pada beberapa kali lokakarya, demikian pula musikus Timor-Leste, Gil dan Jimmy Madeira. Musik merupakan bagian budaya Timor-Leste yang memiliki kekayaan khusus, dan bahkan peserta yang datang dari berbagai distrik yang berbeda di Timor-Leste, dengan bahasa yang berbeda, mengenali lagu-lagu Tetum. Lagu-lagu ini dikaitkan dengan pengalaman dan emosi-emosi personal, serta menjadi katalis bagi diskusi mengenai apa yang dirasakan oleh para *survivor* dalam hidup mereka di masa kini, dan tentang dukungan yang mereka terima atau tidak mereka terima dari keluarga dan komunitas mereka.

156. Nyanyian dan permainan drama juga memungkinkan peserta untuk mengungkapkan perasaan mereka melalui ekspresi fisik yang lembut. Cara ini terutama penting karena banyak *survivor* yang menderita cacat fisik atau merasa terbatas dalam tubuh mereka setelah melewati penderitaan fisik dan emosi yang luarbiasa. Ragam-ragam kegiatan ini bertujuan membantu para peserta untuk mengidentifikasi dan mensyukuri kemampuan mereka untuk bertahan hidup dan keberanian mereka untuk membangun kembali hidup mereka. Pengakuan atas kekuatan dan keindahan peserta, serta proses pembelajaran dari semua itu, merupakan perhatian utama pada hari kedua lokakarya.

157. Setelah kegiatan hari kedua selesai, para peserta dibawa berkeliling kota Dili. Bagi banyak peserta, acara jalan-jalan ini merupakan kesempatan pertama untuk melihat objek-objek nasional seperti patung Kristus di pinggiran kota Dili, kuburan Santa Cruz, parlemen nasional, universitas nasional dan pantai Dili. Kesempatan ini juga dipakai untuk mengantar orang-orang ke pelayanan medis serta layanan-layanan lain di rumah sakit nasional.

Hari ketiga

158. Hari ketiga dimulai dengan para anggota kelompok saling memperlihatkan karya seni masing-masing di kelompok mereka, dan berdiskusi tentang arti gambar-gambar itu bagi mereka. Hal ini diikuti dengan diskusi mengenai arti kegiatan tersebut bagi perjalanan pemulihan peserta, sekali lagi dengan berfokus pada rasa syukur atas segala pencapaian peserta, besar maupun kecil. Para peserta kemudian diberitahu mengenai aspek finansial Skema Reparasi Mendesak. Telah diputuskan sebelumnya bahwa para peserta tak diberitahu tentang hal ini sejak awal acara, agar

lokakarya tidak samasekali terfokus pada masalah finansial. Para anggota tim Komisi mendampingi diskusi-diskusi dalam kelompok kecil bersama dengan para peserta untuk bertukar pikiran bagaimana mereka bisa menggunakan dana bantuan guna memperbaiki kehidupan mereka dengan cara yang berkelanjutan. Setelah itu, para peserta mengikuti diskusi kelompok dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang mereka pikir perlu disampaikan oleh Komisi dalam Laporan Akhir Komisi.

159. Lokakarya diakhiri dengan upacara renungan, terkadang misa, dengan pemberian sertifikat bagi para peserta atas partisipasi dan sumbangan mereka.

Tarian orang-orang yang terluka

Seorang anggota tim Komisi teringat pada saat yang mengharukan pada hari kedua lokakarya pemulihan pertama pada Juni 2003:

Ini untuk pertama kalinya kami mencoba kegiatan bernyanyi, dengan diiringi permainan gitar Gil Madeira. Sekitar 15 orang dari kami duduk membentuk lingkaran, dan sambil kami bercerita tentang masa-masa yang berbeda dalam hidup kami, masa-masa bahagia dan menderita, Gil bertanya pada para anggota kelompok, barangkali ada lagu yang mereka tahu, yang berkaitan dengan pengalaman pada masa itu. Perlahan, kami menyanyi bersama ketika ada anggota yang memberi usul atau mulai menyanyi.

Seorang perempuan paruh baya dari Aileu minta, ketika istirahat minum kopi, jika ada waktu untuk menari bersama, menarikan tebe-tebe yang berbeda-beda dari daerah ke daerah di Timor-Leste. Waktu kami menyanyi, ia berdiri dan perlahan mulai menarikan tebe-nya. Para peserta sedikit malu-malu, dan tidak ada seorang pun yang berdiri untuk bergabung dengannya. Karena itu saya bergabung dengannya, tapi sambil memintanya untuk mengajari saya. Kami bergandengan tangan, dan perlahan bergerak melingkar. Satu per satu peserta bergabung. Gerakan tarian tebe yang kami tarikan waktu itu pelan sekali. Sejumlah peserta dengan tubuh cacat sangat parah, akibat pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami, meskipun sudah lama terjadi. Kami tidak berbicara, hanya saling pandang-memandang, dan saling menyemangati dengan mata kami pada para peserta yang belum bergabung dalam tarian. Akhirnya kami membentuk lingkaran penuh, berayun perlahan dan bergerak sesuai irama tebe Aileu saudara perempuan tua kami.

Setelah selesai menari kami semua duduk dalam kesunyian yang membahagiakan. Kami tahu kami telah berbagi sesuatu yang sangat berarti.

160. Selain kegiatan yang telah direncanakan, pengalaman para peserta saat waktu istirahat pun penting untuk memperkaya pengalaman mereka selama lokakarya. Bagi banyak peserta, istirahat minum kopi atau makan merupakan saat untuk merenungi manfaat yang bisa diambil dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Para anggota tim Komisi siap mendengarkan, memberikan rasa tenang atau bantuan selama lokakarya berjalan. Ada kalanya para peserta bisa duduk bersama-sama dan menjalin persahabatan. Pada malam hari, para peserta kembali ke tempat mereka menginap di Kesusteran Canossian. Staf Komisi menemani mereka dan terus memberikan perhatian dan dukungan.

161. Bagi sejumlah peserta kegiatan-kegiatan harian itu membangkitkan masalah emosional dan psikologis yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu sehingga mereka selalu diawasi dan dibantu jika perlu. Staf dukungan bagi korban di tingkat nasional berperan penting dalam pekerjaan ini. Staf dukungan bagi korban di tingkat distrik juga memainkan peran dukungan yang berharga selama lokakarya, karena mereka berasal dari komunitas para peserta dan telah melakukan perjalanan bersama peserta ke Dili. Mereka biasanya berbicara dengan bahasa yang sama dan telah menjalin hubungan yang dapat terus berlanjut sesudah mereka kembali ke distrik masing-masing.

Dukungan sesama korban

Menciptakan lingkungan di mana para *survivor* dapat saling bertemu, saling berbagi kisah dan saling mendukung, sangat penting untuk keberhasilan lokakarya pemulihan. Setiap kelompok membangun dinamika dan interaksinya sendiri, namun rasa saling peduli dan saling dukung selalu merupakan inti lokakarya.

Peran khusus yang dimainkan sementara *survivor* dalam menciptakan suasana seperti itu memberi kesan bahwa dukungan antarkorban dapat digunakan dalam pekerjaan di bidang ini pada masa depan. Olga yang berasal dari Desa Mau Chiga (Hatu Builico, Ainaro) di wilayah pegunungan tengah, memberikan kesaksian pada Audiensi Publik Nasional Komisi mengenai Perempuan dan Konflik pada April 2003. Kisahnya tentang kekerasan seksual dan perbudakan seksual yang terus menerus terjadi pada 1982 merupakan kisah yang pertama kali didengar bangsa Timor tentang penderitaan perempuan di Mau Chiga setelah penduduk desa bergabung dalam pemberontakan melawan militer Indonesia. Pada Januari 2004, Olga dan anak perempuannya yang masih remaja menemani seorang perempuan paruh baya dari Mau Chiga mengikuti lokakarya pemulihan khusus untuk perempuan. Selama lokakarya berlangsung, Olga memberi dukungan kepada perempuan paruh baya tersebut dan juga kepada para peserta lainnya, serta membagi pengalamannya pada mereka. Anak perempuannya turut

dalam kegiatan menyanyi dan melukis dan sangat disayang oleh para peserta.

Peranan Olga sebagai seorang pendukung, selain membantu temannya dari Mau Chiga, juga merupakan langkah lebih lanjut dalam memulihkan dirinya sendiri. Ia juga menunjukkan kepada para peserta yang lain bahwa *survivor* dapat melangkah maju di sepanjang perjalanan ini, betapapun pelannya. Olga juga menunjukkan bagaimana jaringan *survivor* dapat saling membantu.

Refleksi tentang lokakarya pemulihan

162. Berbagai komentar yang dibuat selama berlangsungnya lokakarya, dan evaluasi internal Komisi tentang kerja-kerja dukungan korban yang dilaksanakan dengan para peserta tertentu, menunjukkan bahwa Lokakarya Pemulihan mempunyai dampak yang sangat penting dan positif terhadap para peserta.* Meskipun menceritakan kembali kisah-kisah mereka sering menyakitkan dan emosional, para peserta mengungkapkan rasa terimakasih untuk kesempatan berbagi pengalaman. Misalnya, Marcelina Poto dari Oecussi menceritakan bahwa ia menyaksikan pembunuhan terhadap suaminya dan pembakaran rumahnya yang dilakukan oleh milisi. Ia berkata:

Pada saat saya berbicara di sini saya merasakan kepedihan yang mendalam, namun saya juga merasakan sedikit kebahagiaan, karena saya mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan teman-teman yang penderitaannya sama dengan penderitaan yang saya alami.

163. Seorang perempuan dari Viqueque juga merasa bahwa pengalamannya sulit tapi berharga. Ia teringat telah diperkosa setiap hari dalam jangka waktu yang panjang oleh seluruhnya sekitar 40 laki-laki. Ia berkata bahwa karena perkosaan-perkosaan ini ia hamil dan melahirkan empat anak. Ia berkata:

Ketika saya teringat dan menceritakan kisah ini, saya merasa malu dan sakit hati, tapi saya harus bicara, sehingga dapat mengurangi penderitaan saya.

164. Ketika ditanya secara lebih lugas bagaimana pendapat mereka mengenai Lokakarya Pemulihan, para peserta mengatakan mereka puas dengan program tersebut, dan berterimakasih kepada Komisi yang telah memberi kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi.

* Bagian ini dan bagian tentang Skema Reparasi Mendesak CAVR mencakup kutipan dari orang Timor-Leste yang berpartisipasi di dalam evaluasi dukungan korban yang dilaksanakan oleh Divisi *Acolhimento* dan dukungan korban. CAVR. Arsip CAVR Maret 2004.

Pokok-pokok program menurut pandangan peserta

Bagi kebanyakan peserta, bagian yang paling penting dari program itu adalah konseling kelompok—kesempatan untuk berbagi kisah mereka dengan yang lain. Ketika mereka ditanya apa yang mereka harapkan bisa mereka peroleh selama tiga hari tersebut, sebagian besar peserta menjawab seperti yang dikatakan oleh Rosa Kolobere dari Suai:

Saya datang untuk membagi pengalaman saya dengan teman-teman. Ketika kita saling berbagi, kita dapat meringankan penderitaan kita dan hidup sehari-hari menjadi lebih mudah.

Atau seperti yang dikatakan oleh Angelina da Costa dari Ainaro dengan singkat, “Saya ingin menceritakan kisah saya.”

Mengingat kembali program tersebut, Verónica Moniz dari Bobonaro mengatakan bahwa ia menyukai lokakarya tersebut karena keragaman kegiatannya.

Lokakarya Pemulihan membuat saya senang dan membuat saya berhenti cemas, karena lokakarya-lokakarya itu membuat kami melakukan banyak kegiatan, seperti menggambar bunga, menyanyi, dan yang lainnya.

“Saya menyukai semuanya,” ujar Bernadino Loeleto dari Maliana, “tapi bagian yang paling saya sukai adalah drama singkat yang lucu, tentang mengundang orang datang ke pernikahan. Saya memainkan peran sebagai bapak baptis.”

Luis Afonso dari Lolotoe (Bobonaro) berkomentar bahwa ia banyak belajar dari program ini secara umum. Baginya dan yang lain bagian terpenting dari pengalaman ini adalah kunjungan ke Dili.

[Kutipan-kutipan dari Evaluasi Program *Acolhimento* dan dukungan Korban CAVR. Januari ke Maret 2004.]

165. Lokakarya pemulihan untuk masyarakat selama tiga hari ini merupakan interaksi yang paling intensif yang pernah dilakukan oleh Komisi dengan para korban. Dari interaksi ini, dan juga dari interaksi-interaksi lain dengan korban, Komisi memperoleh sejumlah pelajaran praktis yang penting yang bisa digunakan dalam pekerjaan dalam bidang ini di masa depan.

166. Harapan Komisi terhadap Lokakarya Pemulihan ini sederhana saja. Dari kerjanya dengan para *survivor*, Komisi menyadari bahwa kebutuhan mereka sebenarnya jauh lebih besar daripada yang bisa ditangani dalam tiga hari. Komisi bermaksud memberi sedikit sumbangan positif demi pemulihan setiap korban,

dengan menolong mereka agar menyadari potensi mereka untuk berkembang melampaui kepedihan penderitaan mereka. Kadang dalam pekerjaan ini, Komisi merasa tak kuasa menahan haru atas berbagai pengalaman sangat buruk yang telah dialami oleh mereka yang bergabung dengan kami; karena dukungan yang bisa ditawarkan Komisi jelas tidak akan mencukupi kebutuhan mereka.

167. Para korban pelanggaran hak asasi manusia membutuhkan berbagai macam bantuan yang terus menerus. Bantuan itu meliputi bantuan ekonomi, layanan pendidikan dan kesehatan, pengakuan secara simbolik, dan tuntutan keadilan. Juga terdapat kebutuhan yang lebih bersifat pribadi, seperti kebutuhan pengakuan pribadi, harga diri, pemberian perhatian dan kasih sayang. Bagi kebanyakan korban masalah yang paling mendesak adalah masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Begitu mendasarnya kebutuhan-kebutuhan itu, sehingga berpengaruh terhadap semua aspek lain dalam kehidupan para korban. Walaupun kecil, sumbangan Komisi dapat dilihat sebagai fondasi yang bisa menjadi dasar bagi program-program dan lembaga-lembaga di masa depan. Program Reparasi yang dianjurkan Komisi berusaha menjawab banyak kebutuhan para *survivor* dari konflik yang berlangsung selama 25 tahun.

Reparasi Mendesak

Latar belakang

168. Ketika tim-tim distrik mulai bekerja di desa-desa di seluruh wilayah Timor-Leste, menjadi jelas bagi mereka bahwa banyak korban pelanggaran hak asasi manusia menghadapi berbagai kebutuhan mendesak yang berkaitan secara langsung dengan berbagai pelanggaran yang pernah mereka alami. Para korban melihat Komisi mungkin sebagai satu-satunya lembaga nasional yang ada untuk membantu mereka. Tampaknya tidak cukup dengan mengatakan kepada para korban agar menunggu sampai datangnya Laporan Akhir dan rekomendasi-rekomendasi Komisi untuk mendapatkan bantuan. Oleh karena itu Komisi mengambil langkah sementara untuk menangani beberapa kebutuhan mendesak para korban, yaitu Skema Reparasi Mendesak.

Alasan adanya skema reparasi

169. Dasar dari Skema tersebut adalah prinsip hukum internasional hak asasi manusia bahwa para korban tindakan pelanggaran memiliki hak atas reparasi. Perjanjian dan hukum kebiasaan internasional serta berbagai instrumen hukum internasional lain menganjurkan bahwa unsur-unsur pokok reparasi meliputi:

- Restitusi (ganti rugi)
- Kompensasi
- Rehabilitasi
- Kepuasan
- Jaminan tidak-terulang

170. Sebagai lembaga negara yang independen, dengan mandat yang didasarkan atas prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional, Komisi berusaha menghormati hak para korban atas reparasi dengan membuat Skema Reparasi Darurat. Komisi menekankan bahwa Skema tersebut dibuat hanya sebagai langkah sementara, untuk dilaksanakan selama Komisi ini ada. Dengan cara apapun Komisi tidak akan merugikan hak para korban atas reparasi penuh sebagai bagian dari penyelesaian jangka panjang. Kecilnya komponen dana bantuan dari Skema tersebut jelas tidak memenuhi persyaratan suatu skema reparasi penuh berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum di atas.

171. Sebagai negara baru yang sedang berusaha menetapkan prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kesetaraan seluruh warga negara, Timor-Leste memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin agar warga negaranya yang menderita kerugian akibat pelanggaran masa lalu mampu melakukan kewajibannya sebagai warga negara Timor-Leste yang berpartisipasi penuh. Negara harus mengambil tindakan yang diperlukan sejauh kemampuannya. Prasyarat sosial atas reparasi terletak pada penciptaan perdamaian dan tujuan pembangunan Timor-Leste. Satu langkah dasar dalam memulihkan perpecahan yang ada akibat konflik bertahun-tahun adalah dengan membantu para korban kekerasan membangun kembali kehidupan mereka. Tanpa perbaikan semacam itu, kekurangan dan pengucilan dapat menciptakan kelompok arus bawah yang tidak puas, yang pada gilirannya akan berakibat pada kekacauan sosial. Demikian pula prioritas pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan di Timor-Leste mensyaratkan agar seluruh warganegara dapat memainkan peran aktif dan konstruktif dalam membangun negara baru ini. Para korban pelanggaran masa lalu berisiko terlupakan dalam proses pembangunan ini.

Pendanaan

172. Komisi sendiri tidak mempunyai dana untuk membuat suatu skema reparasi. Komisi dibantu melalui kerjasama dengan Proyek Pemberdayaan Komunitas dan Pemerintahan Lokal (CEP), sebuah proyek yang dijalankan di bawah Kementerian Dalam Negeri dan didanai oleh Dana Amanah untuk Timor-Leste (Trust Fund for East Timor-TFET) yang dikelola oleh Bank Dunia. CEP mempunyai program untuk membantu “kelompok-kelompok rentan” dan dukungannya untuk Skema Reparasi Mendesak diatur melalui program ini.

Maksud dan tujuan program

173. Maksud dan tujuan utama Skema Reparasi Mendesak adalah untuk memberi reparasi kepada para *survivor* pelanggaran hak asasi manusia, yang kebutuhannya mendesak dan tidak mudah dapat dipenuhi dengan cara lain. Melalui pelayanan kesehatan atau dukungan, atau sedikit sumbangan finansial, Skema ini berusaha memenuhi sejumlah kebutuhan mendesak. Langkah reparasi tidak dianggap sebagai restitusi (ganti rugi) penuh, juga tidak dianggap untuk menggantikan kewajiban negara dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk memberi reparasi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.

174. Komisi tidak pernah membayangkan bahwa program ini akan menyelesaikan masalah tersebut. Namun, program tersebut setidaknya akan meringankan masalah dalam jangka pendek dan membantu para korban agar terus maju dalam proses pemulihan dan restorasi yang lebih panjang. Selain itu Skema tersebut mengembangkan suatu pendekatan berbasis komunitas, bekerjasama dengan LSM hak asasi manusia dan berbagai organisasi komunitas nasional terkemuka dalam mendanai sejumlah model pendekatan yang berorientasi pembangunan komunitas demi pemulihan dan restorasi.

Siapa yang berhak menerima bantuan

175. Tim-tim distrik mengidentifikasi mereka yang berhak menerima bantuan dari program tersebut di antara orang-orang yang dapat ditemui melalui kegiatan pencarian kebenaran dan rekonsiliasi. Penerima hak yang utama adalah para *survivor* pelanggaran langsung seperti: perkosaan, penahanan, dan penyiksaan; demikian juga mereka yang menderita secara tidak langsung akibat penculikan, penghilangan, atau pembunuhan anggota keluarganya. Para calon penerima hak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kebutuhannya harus parah, mendesak, dan berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa mandat 1974-1999. Misalnya, seseorang yang masih menderita luka yang didapat selama penyiksaan, atau seorang janda dengan pendapatan yang tidak memadai karena suaminya dibunuh.
- Orang-orang yang jelas-jelas rentan; misalnya, perempuan janda, yatim piatu, orang cacat, atau seseorang yang dikucilkan dalam komunitasnya. Kerentanan yang dimaksud di sini adalah mereka yang keadaan hidupnya buruk karena konsekuensi-konsekuensi yang bersifat fisik, psikologis, emosional, atau ekonomis yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami.
- Sumber-sumber lain untuk memenuhi kebutuhan tidak ada atau tidak mudah untuk didapat.
- Bantuan ini akan membantu penerima secara berkelanjutan. Misalnya, bantuan tersebut akan memfasilitasi pemulihan harga diri, mencegah pelanggaran lebih jauh, atau akan memberi sumbangan bagi pemberdayaan atau pemulihan yang akan meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang bagi orang yang bersangkutan.

Bentuk-bentuk reparasi

176. Jenis-jenis reparasi yang dapat diberikan oleh Komisi meliputi:

- Dana bantuan darurat sebesar USD 200.
- Perawatan medis dan/atau psikososial yang mendesak

- Peralatan dan/atau pelatihan bagi orang cacat
- Membentuk kelompok-kelompok swadaya korban yang mempunyai berbagai kegiatan untuk memulihkan martabat manusia, seperti kegiatan teater, kegiatan-kegiatan produktif, dll.
- Peringatan suatu peristiwa dengan tujuan memberi pengakuan dan restorasi martabat para korban.
- Penyediaan batu nisan atau monumen untuk meningkatkan pengakuan komunitas atas para korban hilang, dan dengan demikian membantu memberi rasa penyelesaian emosional bagi keluarga korban.
- Perjanjian dengan berbagai organisasi lokal seperti gereja atau kelompok dukungan untuk menyediakan jasa yang berkelanjutan bagi para *survivor*.

Penerapan skema

177. Pada Mei 2003, Komisi membentuk sebuah Komite Reparasi Korban untuk mengawasi program tersebut. Komite itu terdiri atas dua Komisaris Nasional, Koordinator Divisi Dukungan Korban, Manajer Program CAVR, perwakilan anggota LSM hak asasi manusia Timor, Fokupers dan Yayasan Hak, dan seorang biarawati dari Susteran Carmelita.

178. Staf distrik mengidentifikasi calon-calon individu atau komunitas penerima yang memiliki kebutuhan yang mendesak, dan mengajukan masalah mereka kepada Komite Reparasi. Setelah komite menyetujuinya, Komisi memberikan dana bantuan.

179. Komisi juga menugasi organisasi lain untuk menyediakan dukungan bagi para korban. Di sepuluh distrik, Komisi menugasi LSM atau kelompok-kelompok keagamaan yang terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan untuk memberikan dukungan mereka kepada korban-korban yang sudah diidentifikasi selama masa enam bulan. Kesepuluh organisasi tersebut adalah SATILOS (*Fundacao Saude Timor Lorosae*) di Dili; Susteran Canossian di Ainaro, Manatuto, dan Lautém; Komisi Perdamaian dan Keadilan Katolik di Maliana; *Centro Feto Enclave Oecusse* (Lembaga Perempuan Oecussi); Kongregasi Susteran Bayi Yesus di Manufahi dan Baucau; Susteran Fransiskan di Viqueque; dan Susteran PRR (Putri Renha Rosario) di Liquiçá.

180. Setelah Komisi menutup kantor-kantornya di distrik pada Maret 2004, Komisi memutuskan memperpanjang Skema Reparasi Mendesak, tapi dibatasi untuk komunitas atau kelompok tertentu. Komisi mendanai tiga LSM Timor untuk menyediakan berbagai layanan dukungan tersebut: Assosiasaun HAK (Yayasan HAK), Fokupers, dan LSM perempuan ET-Wave. Sebuah program enam bulan direncanakan bersama tiap organisasi dengan menggunakan berbagai prinsip pembangunan komunitas untuk memberi dukungan kepada para korban. Program-program ini berusaha bekerjasama dengan para korban dan komunitas mereka, ketimbang menentukan korban untuk pemberian bantuan perorangan.

Hasil – bantuan yang diberikan

181. Komponen bantuan dana dari Skema Reparasi Mendesak didistribusikan antara September 2003 dan Maret 2004. Dalam periode ini, 516 laki-laki (73% dari penerima) dan 196 perempuan (27%) masing-masing menerima uang tunai sebesar USD200 dengan jumlah keseluruhan sebesar USD142.400 untuk 712 *survivor* pelanggaran hak asasi manusia.

182. Ke-156 orang peserta Lokakarya Pemulihan di kantor nasional Komisi adalah penerima dana bantuan Reparasi Mendesak. Staf Komisi menemani dua penerima dana bantuan ke Yogyakarta, Indonesia, dan di sana kedua orang itu dipasangi kaki buatan dan dilatih menggunakannya.

183. Di sepuluh distrik, 417 *survivor*—322 laki-laki (77%) dan 95 perempuan (23%)— terus menerima dukungan dan bantuan yang diberikan oleh LSM setempat dan kelompok-kelompok gereja. Bantuan ini berupa obat-obatan, antaran ke layanan kesehatan di rumah sakit distrik, konseling, dan bantuan dasar, termasuk anjangsana ke rumah-rumah. Komisi berharap agar begitu terbentuk hubungan dengan mekanisme bantuan setempat, sistem tersebut dapat terus membantu korban, meski Komisi menyadari bahwa keterbatasan sumberdaya di tingkat lokal mungkin menghambat hal tersebut.

184. Ketiga LSM yang dikontrak Komisi untuk menyediakan berbagai layanan bantuan setelah Komisi meninggalkan distrik-distrik, memusatkan upayanya pada kelompok atau komunitas tertentu. Yayasan HAK memfokuskan kerjanya di komunitas Kraras-Lalerik Mutin di Viqueque. Komunitas Kraras mengalami pembantaian yang mengerikan pada 1983, dan para *survivor* kejadian itu dipindahkan ke dekat Lalerik Mutin. Daerah itu sekarang dikenal sebagai ‘desa janda’. Dalam program enam bulan, Yayasan HAK bekerja dengan komunitas tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas komunitas, dan membangun sebuah pusat pendidikan masyarakat.

185. Fokupers dan ET-Wave memberi dukungan lanjutan kepada perempuan yang telah memberikan pernyataan, dan berpartisipasi dalam audiensi dan/ atau Skema Reparasi Mendesak. Fokupers bekerja di lima distrik: Dili, Liquiçá, Bobonaro, Ermera, dan Suai. ET-Wave bekerja di Lautém. Selain melakukan tindak lanjut dengan perempuan secara perorangan, organisasi tersebut bekerja dengan komunitas-komunitas untuk menangani pengucilan yang dialami oleh para korban, khususnya para perempuan di perdesaan.

David Rodriguez, penerima kaki buatan

David Rodriguez masih muda ketika invasi Indonesia terjadi pada 1975. Ia dan ayahnya terluka parah ketika terjadi penembakan dan pengeboman yang dilakukan oleh militer Indonesia. Tangan ayahnya terluka sangat parah hingga akhirnya sang ayah meninggal akibat infeksi. David dirawat

dengan obat-obat tradisional seperti daun jagung dan selamat dari luka pada kakinya. Tapi, karena ia terjebak di gunung tanpa akses ke layanan kesehatan, lukanya terkena infeksi dan kaki David mulai membusuk. Selama tujuh bulan kakinya membusuk, mengeluarkan bau yang sangat kuat hingga ia dipaksa hidup di pengasingan. Setiap hari keluarganya mengirim makanan dan kemudian meninggalkannya. Akhirnya kakinya putus dan David merawat bagian kakinya yang masih ada dengan obat-obat tradisional. Ia belajar berjalan lagi dengan menggunakan sebuah tongkat. Pada 1979 ia menyerah kepada militer Indonesia di Rotutu (Same, Manufahi). Orang-orang Indonesia mengobati orang-orang Timor lain yang terluka; beberapa orang bahkan dibawa ke Indonesia untuk dipasang anggota badan buatan. Namun karena David berasal dari Desa Mau Chiga (Hatu Builico, Ainaro), yang dikenal sebagai desa pro-Fretilin, ia tidak menerima bantuan apa pun.

Setelah kemerdekaan, David memberi pernyataan kepada Komisi. Ia berpartisipasi dalam sebuah Lokakarya Pemulihan, di mana ia diberi dana bantuan reparasi darurat sebesar USD200. Ia juga diantar ke Yogyakarta (Indonesia) di mana ia menghabiskan waktu dua minggu untuk dipasang kaki palsu dan diberi latihan penggunaannya. Sepulang ke Timor-Leste, ia datang ke kantor nasional Komisi dengan wajah berseri-seri, kemudian membuka sepatu dan kaus kakinya untuk memperlihatkan kaki barunya kepada staf dan kawan-kawan. Ia berkata kepada anggota Komisi yang menemaninya ke Yogyakarta:

Kadang saya pikir saya bermimpi. Saya orang buta huruf, tidak sekolah, tapi saya bisa naik pesawat, mengunjungi tanah lain, dan mendapatkan bantuan macam ini. Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Komisi dari lubuk hati saya yang dalam atas semuanya.

Carminda dos Santos, rumah milik sendiri

Ketika Indonesia menginvasi Timor-Leste pada 1975, Carminda dos Santos, bersama suami dan kedua anaknya yang masih kecil, mengungsi ke hutan, di mana suaminya kemudian meninggal dunia.

14 Juli 1993, Carminda dan kakak laki-lakinya ditangkap oleh tentara Indonesia dan dibawa ke pos Koramil di Bobonaro karena dicurigai membantu paman mereka, Martinho, seorang pejuang gerilya di hutan. Carminda juga dituduh terlibat dalam penghancuran patung Bunda Perawan Maria di Malilait Grotto di Subdistrik Bobonaro. Carminda dan kakak laki-lakinya dihajar habis-habisan, kepala mereka dibenturkan ke tembok, mereka ditendang dengan sepatu lars tentara, dan tubuh mereka diinjak. Sejak saat itu Carminda menderita kejang-kejang.

Setelah rumah Carminda dijarah dan dibakar oleh milisi pada 1999, ia dan anak perempuannya pindah dan tinggal bersama kakak laki-lakinya. Tetapi mereka tidak pernah merasa benar-benar nyaman karena ia dan kakak laki-lakinya selalu bertengkar. Carminda merasa bahwa ia dan anaknya terlantar. Mereka tidak memiliki rumah sendiri dan baik pemerintah setempat maupun keluarganya tidak memperhatikan atau membantu mereka.

Ketika tim distrik Komisi mulai mengambil pernyataan di Bobonaro, anak perempuan Carminda, Regina dos Santos, memberi pernyataan termasuk tentang kisah bagaimana ibu dan pamannya disiksa oleh tentara Koramil di Bobonaro pada 1993. Ia menceritakan tentang kondisi syaraf dan hilangnya ingatan Carminda. Staf Dukungan untuk Korban mengunjungi Carminda dan menawarkan konsultasi padanya. Ia juga diberi USD200 sebagai bagian dari Skema Reparasi Mendesak. Dalam kunjungan kembali beberapa bulan kemudian, staf Dukungan untuk Korban melihat berbagai perbaikan di dalam hidup Carminda. Ia sudah memiliki rumah sendiri, syaraf dan ingatannya telah kembali normal. Carminda sangat bahagia dan mengucapkan terimakasih yang teramat sangat kepada Komisi. Walaupun ia dan anak perempuannya hanya tinggal di dalam sebuah gubuk kecil, namun gubuk itu milik mereka sendiri.

Penggunaan dana bantuan

186. Jumlah uang sebesar USD200 untuk satu bantuan dirancang agar cukup bagi si penerima untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara praktis, dengan melakukan berbagai kegiatan atau untuk jual-beli barang dan jasa. Tentu saja ini tidak cukup untuk membiayai intervensi besar atau yang berkesinambungan, seperti yang umumnya diperlukan oleh kebanyakan korban pelanggaran hak asasi manusia berat.

187. Para penerima dana bantuan menggunakan uangnya dengan berbagai cara. Pengobatan, pendidikan anak, dan melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan seperti beternak adalah rencana-rencana yang umum mereka lakukan. Penggunaan lainnya misalnya untuk membeli makanan, pakaian, dan untuk rumah.

Penggunaan dana bantuan Reparasi Mendesak

Para penerima reparasi mendesak memang bebas untuk menggunakan uang yang diberikan sesuai kemauan mereka sendiri. Namun, Komisi menekankan agar uang yang diterimanya digunakan untuk perbaikan kualitas hidup seterusnya. Bagi banyak orang memang inilah yang terjadi.

“Saya pakai uangnya untuk membeli obat, untuk mengobati penyakit saya, dan sekarang saya merasa sedikit lebih baik. Saya merasa cukup sehat untuk melakukan beberapa pekerjaan ringan. Saya biasanya batuk parah dan sekarang saya jarang batuk,” ujar seorang korban ketika dikunjungi beberapa bulan, setelah menerima dana bantuannya.

“Sewaktu saya menerima uang dari Komisi saya menggunakannya untuk membeli...obat tradisional Timor dan juga obat dari apotek, untuk mengobati sakit saya. Sejak saat itu saya merasa sehat,” kata korban yang lain. Ia menambahkan, dengan sisa uangnya ia juga membeli seekor babi untuk ditanakkan dan untuk berbelanja.

Manuel Laka Suri juga menggunakan sebagian dari uangnya untuk memperbaiki kesehatannya. Sisanya ia gunakan “untuk membayar orang yang menjaga ladang saya, berbelanja, dan membayar uang sekolah anak-anak.”

188. Kebanyakan penerima bantuan berterimakasih kepada Komisi atas bantuan keuangan ini, meskipun banyak yang mengatakan bahwa uang USD200 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena masalah kesehatan merupakan kebutuhan yang paling sering dikemukakan oleh para korban, dan juga kerugian ekonomi akibat pelanggaran yang telah mereka alami, masih perlu dipertimbangkan langkah-langkah reparasi yang berkesinambungan, termasuk bantuan yang berkesinambungan bagi para penerima Skema Reparasi Mendesak. Rekomendasi Komisi tentang reparasi membahas masalah ini (lihat Bagian 11: Rekomendasi)

Tanggapan anggota komunitas

Pemberian dana bantuan kepada perorangan dalam konteks kemiskinan umum di Timor-Leste selalu memiliki potensi masalah. Sementara banyak keluarga dan anggota komunitas mendukung, ketika mereka mengetahui bahwa seseorang telah menjadi penerima dana bantuan, kadang terjadi kecemburuan. Karena adanya potensi reaksi negatif komunitas, Komisi tidak mengumumkan bantuan yang diberikan dan memberitahu kepada para penerima bahwa bagi Komisi dana bantuan tersebut bersifat rahasia.

Seseorang lelaki penduduk Maliana (Bobonaro), menyembunyikan penerimaan uang tersebut dari komunitasnya: “Uang itu adalah rahasia, jadi saya tidak beritahu siapapun, dan tak seorang pun bertanya mengenai hal itu.”

Demikian pula, seorang perempuan dari Bobonaro mengatakan:

Saya tidak beritahu siapapun mengenai uang tersebut karena Komisi berkata itu rahasia. Saya takut kalau orang-orang dengar, mereka akan pukul saya, karena banyak korban lain yang tidak terima uang.

Namun, untuk beberapa korban menyembunyikan tidaklah mungkin. Ketika anggota komunitas mendengar bahwa tetangga mereka telah menerima uang, tanggapan mereka beragam. Komunitas tempat tinggal Manuel Laka Suri, yang sepenuhnya menghargai keadaannya, berterimakasih kepada Komisi atas bantuannya kepada Manuel untuk mengobati sakitnya.

Para anggota komunitas Ponciano Maia tidak menolak tapi juga tidak mendukung secara aktif. Menurut Ponciano Maia, komunitasnya “tidak membuat masalah dengan saya, karena mereka tahu bahwa saya telah sangat menderita dalam peperangan, jadi mereka diam saja.”

Ponciano de Araújo memperoleh pengalaman yang berbeda. Beberapa anggota komunitasnya bertanya: “Kenapa kami tidak mendapatkan uang sedikitpun? Kita semua adalah korban.”

Tinjauan terhadap Skema Reparasi Mendesak

189. Dampak bantuan Reparasi Mendesak bervariasi antara penerima yang satu dengan penerima yang lain. Semua itu bergantung pada, antara lain, keadaan fisik dan psikologis si penerima sebelum menerima bantuan, jenis kebutuhan yang dihadapi, dan lingkungan keluarga dan sosial orang tersebut. Namun Komisi percaya bahwa Skema tersebut telah berhasil mewujudkan perbaikan-perbaikan kualitas hidup yang kecil namun bermakna bagi para korban berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

190. Skema tersebut juga merupakan bagian dari suatu strategi yang lebih luas untuk memberi pengakuan secara resmi atas penderitaan para korban dan untuk membangun hubungan yang multidimensional dengan para korban. Tahap pertama dalam hubungan ini dimulai saat korban memberi pernyataan kepada Komisi. Beberapa dari mereka kemudian memberikan kesaksian pada audiensi publik, yang lainnya berpartisipasi dalam berbagai lokakarya pemulihan, sementara beberapa korban lain berpartisipasi dalam audiensi rekonsiliasi komunitas di desa masing-masing.

191. Banyak komentar orang-orang yang berpartisipasi dalam Skema Reparasi Mendesak menekankan pentingnya hubungan dengan Komisi bagi mereka. Warga desa Ritabou, Tiimatan (Bobonaro) berkata: “Saya merasa sangat bahagia karena masih ada beberapa teman yang memperhatikan kami.” Dengan mengungkapkan perasaan tentang kerentanannya dan kurangnya dukungan bagi korban seperti dirinya, seorang warga desa Colegio (Bobonaro) mengatakan:

Saya merasa senang karena Komisi membantu memperhatikan para korban. Kalau tidak, kami tidak tahu siapa lagi. Saya merasa senang karena masih ada sebuah Komisi dan LSM yang baik, seperti Komisi dan CEP yang membantu para korban.

192. Ponciano de Araújo merangkum tanggapan dari banyak korban ketika ia mengatakan:

Saya ingin berterimakasih kepada semua teman yang bekerja di Komisi, yang telah memberikan pengakuan atas perjuangan dalam perang dan penderitaan serta kekhawatiran kami yang luarbiasa.

193. Secara keseluruhan jumlah korban yang diuntungkan secara langsung dari Skema Reparasi Mendesak kecil dibandingkan dengan 7.824 pernyataan yang diambil dalam pekerjaan pencarian kebenaran Komisi. Namun, bantuan yang diberikan telah memberi perbedaan yang nyata terhadap kehidupan sejumlah korban yang paling rentan. Skema tersebut juga memberikan semacam dukungan moral, emosional, dan spiritual. Sebagai langkah sementara dalam keseharian kerja Komisi, Skema itu memperlihatkan komitmen Komisi dalam memberi kepastian pada para korban untuk menerima bantuan semacam ini. Skema Reparasi Komisi, yang tercantum dalam Bagian 11: Rekomendasi, menjelaskan secara ringkas berbagai rekomendasi Komisi mengenai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melanjutkan dan mengembangkan pekerjaan ini.

Profil Komunitas

Latar belakang

194. Lokakarya Profil Komunitas menambahkan dimensi kelompok pada pekerjaan tim distrik dalam pencarian kebenaran dan dukungan pada korban. Kelompok-kelompok kecil dari masyarakat desa mendiskusikan dampak pelanggaran hak asasi manusia di tingkat desa. Lokakarya-lokakarya ini difasilitasi dan direkam oleh para

anggota tim dukungan pada korban dari tim distrik. Dengan demikian masyarakat berkemungkinan memeriksa sejarah konflik itu dari perspektif mereka sendiri. Fokus komunal lokakarya juga mengakui bahwa masyarakat, selain orang per orang, juga menjadi korban selama masa-masa konflik dan membutuhkan dukungan.

195. Di sebagian besar daerah, tim distrik menggunakan lokakarya profil komunitas untuk memperkenalkan program mereka kepada komunitas. Selain membicarakan mandat dan program Komisi, tim distrik juga melibatkan diri dengan komunitas dalam kegiatan praktis yang berbasis komunitas dan bersifat terbuka. Dengan memilih lokakarya sebagai pintu masuk ke program yang lebih luas, Komisi bermaksud memperlihatkan rasa hormatnya pada komunitas dan memperoleh pemahaman terhadap kekhususan setiap komunitas. Tim juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai kelompok-kelompok tertentu dalam komunitas yang mungkin akan membutuhkan dukungan tambahan, atau apakah kegiatan-kegiatan rekonsiliasi komunitas relevan bagi komunitas yang bersangkutan.

196. Profil komunitas menjadi bagian yang penting dan memperkaya pekerjaan Komisi karena berbagai alasan. Singkatnya, alasan-alasan itu ialah:

- Di daerah perdesaan Timor-Leste, kegiatan yang bersifat komunal dan bukan perorangan sering merupakan cara yang secara kultural lebih tepat dan efektif untuk membahas masalah penting. Kegiatan ini juga merupakan cara yang baik untuk menggali kekayaan tradisi lisan masyarakat perdesaan.
- Lokakarya ini merupakan kesempatan untuk mencari tahu pandangan komunitas mengenai apa yang dapat dilakukan oleh korban untuk membantu pemulihan mereka dari penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Bahkan juga bagi komunitas-komunitas yang tidak banyak membicarakan kebutuhan untuk pemulihan komunitas, pengingatan kembali pada pengalaman masa lalu itu sendiri sudah merupakan suatu proses pemulihan.
- Dari sudut pandang pencarian kebenaran, lokakarya-lokakarya Profil Komunitas melengkapi hasil pengumpulan pernyataan individu. Lokakarya tersebut sangat berguna khususnya dalam mengidentifikasi pola-pola pengalaman sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas, dan dampak mendalam dari pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas selama 25 tahun periode mandat.
- Cerita-cerita yang muncul dari lokakarya profil komunitas mengungkapkan bagaimana berbagai daerah dan komunitas mengalami penderitaan di sepanjang masa konflik, dalam bentuk dan kurun waktu yang berbeda-beda. Cerita-cerita yang beraneka ragam dari daerah ke daerah seperti itu tidak bisa diperoleh dari perspektif nasional; sementara perspektif komunitas yang lebih luas tidak dapat diperoleh melalui pernyataan-pernyataan perseorangan.
- Cerita-cerita ini semakin membantu kita dalam memahami situasi komunitas-komunitas setempat pada saat ini, dan dalam merencanakan cara-cara mencegah konflik di masa depan.

Proses seleksi

197. Komisi melatih dua orang staf distrik Dukungan Korban, seorang perempuan dan seorang laki-laki di tiap distrik, mengenai metode partisipatoris dalam memfasilitasi lokakarya profil komunitas. Masing-masing tim menargetkan untuk memfasilitasi lima diskusi komunitas di tiap subdistrik. Sekurang-kurangnya satu dari lima diskusi tersebut harus melibatkan para pengungsi yang baru kembali, dengan mengutamakan mereka yang mengalami pengucilan oleh komunitas tempat mereka kembali. Satu kelompok diskusi lainnya dikhususkan untuk perempuan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai hal yang menjadi halangan bagi partisipasi aktif perempuan dalam diskusi kelompok, khususnya apabila yang didiskusikan adalah cerita sejarah yang secara tradisional sudah menjadi bagian kaum laki-laki.

198. Pemilihan desa-desa dan kelompok-kelompok khusus yang akan melaksanakan lokakarya menjadi tanggung jawab staf Dukungan Korban Distrik bersama dengan Koordinator Distrik dan Komisariss Regional. Pemilihan ini didasarkan atas pengetahuan anggota tim lokal yang biasanya sudah terlebih dahulu mengenali sesuatu daerah, atau atas dasar informasi yang muncul dalam pertemuan tingkat subdistrik yang diadakan pada awal periode tiga bulan program subdistrik. Pada pertemuan-pertemuan ini para pejabat subdistrik, kepala desa, dan tetua masyarakat biasanya mengidentifikasi desa-desa yang ditempati oleh banyak pengungsi yang baru kembali. Mereka juga memilih orang-orang perempuan yang akan mengikuti kelompok diskusi, dengan mengutamakan mereka yang mengalami pelanggaran atau pernah aktif dalam gerakan Resistansi.

199. Pada praktiknya, banyaknya lokakarya Profil Komunitas di masing-masing subdistrik berbeda-beda. Beberapa tim tidak dapat mencapai target lima diskusi komunitas, sementara yang lainnya bisa mengadakan lokakarya di setiap desa dalam distrik mereka. Terkadang staf distrik mengadakan lokakarya gabungan yang diikuti oleh dua atau lebih desa. Di beberapa subdistrik seperti misalnya di Subdistrik Natarbora (Manatuto) dan Subdistrik Bobonaro (Bobonaro), beberapa komunitas yang mempunyai sejarah konflik sengaja dipertemukan. Dalam kasus-kasus yang demikian, lokakarya ini memainkan peran rekonsiliasi tambahan. Melalui cerita tentang kebenaran dan tukar-menukar pandangan, masing-masing komunitas dapat memahami lebih baik asal-usul permusuhan sehingga dapat mengatasinya bersama. Dengan begitu lokakarya-lokakarya ini berperan sebagai sarana rekonsiliasi.

Diskusi komunitas meredakan ketegangan sejarah

Bobonaro adalah subdistrik besar yang terdiri atas 18 desa. Tim Distrik Komisi memutuskan bahwa penting bagi semua desa itu untuk ikutserta dalam lokakarya-lokakarya Profil Komunitas, karena semuanya telah menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia

selama 1974-1999, dan semua menyatakan setuju mengambil bagian. Beberapa desa mengadakan diskusi gabungan.

Desa-desanya yang bertetangga seperti Oeleu, Tapo, dan Leber sengaja dipilih untuk ikut dalam diskusi gabungan karena sejarah konflik yang panjang telah terjadi di desa-desa tersebut. Sudah sejak puluhan tahun yang lalu, laki-laki dari desa-desa ini berperang satu sama lain untuk memperebutkan tanah dan batas-batas komunitas. Selama konflik sipil 1974-1975 itu, ketegangan antara tiga desa tersebut meledak menjadi tindak kekerasan. Walaupun invasi dan pendudukan Indonesia telah menghentikan konflik terbuka mereka, perbedaan komunal dan politik yang terjadi sebelumnya dipertajam oleh hubungan mereka yang berbeda dengan pasukan pendudukan. Rasa tidak percaya dan keinginan balas dendam terus terpendam dan meluap kembali setelah Jajak Pendapat pada Agustus 1999.

Dalam lokakarya Profil Komunitas, para peserta dari desa-desa itu saling menuduh, sehingga dengan lebih jelas mengungkapkan ciri konflik mereka yang bersejarah.

Masyarakat Desa Leber menyangka desa-desa Tapo dan Oeleu merupakan pusat aktivitas partai UDT, yang loyal terhadap pemerintah kolonial Portugal. Penduduk Desa Tapo sudah lama menaruh curiga terhadap penduduk Desa Leber, pertama-tama sebagai desa Apodeti dan kemudian sebagai basis pasukan khusus Indonesia (Kopassus). Tapo menuduh Leber telah membunuh rakyat sipil, sementara Leber mengingatkan kepada mereka yang hadir bahwa pada pertengahan 1970-an, para pendukung Fretilin di Tapo dan Oeleu telah menyerang Leber, membakar ratusan rumah, dan mengakibatkan penduduk Leber melarikan diri ke gunung-gunung. Sebaliknya, para peserta dari Oeleu menyalahkan Fretilin atas pemindahan paksa pada 1975 terhadap ratusan pendukung UDT yang mengungsi ke pergunungan Covalima atau lari ke Timor Barat. Walaupun kemudian Tapo dan Oeleu dianggap sebagai basis pendukung Fretilin, menjelang kemerdekaan desa-desa ini juga dikenal sebagai kubu milisi prointegrasi.

Namun kecurigaan dan ketegangan ini mulai mereda ketika masing-masing komunitas menceritakan kisah-kisah kekerasan yang mengerikan yang terjadi pada mereka.

Peserta dari Oeleu mengatakan bahwa militer Indonesia telah membunuh ratusan orang pada 1975-1976. Ini diikuti pada 1978-1979 ketika ratusan orang mati akibat penyakit dan kelaparan. Mereka menceritakan bahwa sekitar seratus orang laki-laki dari desa mereka ditangkap dan direkrut dengan paksa oleh ABRI. Pada 1986, Program Keluarga Berencana Indonesia diperkenalkan dan mengakibatkan kematian empat perempuan di Oeleu. Selama 1980-an, perekrutan paksa sejumlah laki-laki untuk menjadi Hansip

(Pertahanan Sipil) disertai dengan pemukulan dan penyiksaan. Pada pertengahan sampai akhir 1990-an, organisasi klandestin muncul, dan sekitar 80 orang pemuda desa masuk organisasi-organisasi klandestin. Banyak pemuda Oeleu dicurigai, ditangkap, dan disiksa. ABRI juga menjawab perkembangan demikian ini dengan memaksa pemuda desa menjadi Hansip. Mereka yang menolak, dipukuli dan dihantam dengan parang. Pada 1999, beberapa pemuda diintimidasi supaya masuk kelompok milisi, Dadurus Merah Putih. Pada minggu-minggu menjelang Jajak Pendapat, mereka membakar sekitar 200 rumah, merampok yang lain, dan membunuh enam orang di Oeleu. Sebelum dan sesudah Jajak Pendapat, banyak penduduk melarikan diri ke gunung-gunung. Sesudah hasil Jajak Pendapat diumumkan, sekitar 200 keluarga dievakuasi ke Atambua, dan di sana kira-kira 50 orang mati karena penyakit dan seorang dibunuh.

Para peserta dari Tapo menjelaskan tentang desa mereka yang menjadi kubu pendukung UDT pada pergolakan politik 1974 – 1975, kemudian beralih bergabung dengan Fretilin dalam melawan pendukung Apodeti dari Leber yang mendukung ABRI, yang telah membunuh penduduk sipil dan mengibarkan bendera Indonesia di desa tetangga. Pada 1976 - 1977, ABRI dan Fretilin terus-menerus terlibat dalam konflik bersenjata, yang menyebabkan kematian di kedua belah pihak, juga rusaknya ratusan rumah di sekitar Tapo. Seperti penghuni Oeleu, penduduk desa Tapo bercerita tentang ratusan penduduk desa mereka yang menderita, pertama setelah evakuasi ke hutan-hutan, dan kemudian ketika dimukimkan di kamp-kamp pengungsi di distrik tetangga di Ermera. Ratusan orang mati karena kelaparan dan penyakit. Para peserta dari Tapo juga mengenal para lelaki yang direkrut dengan paksa oleh militer Indonesia, yang selama 1980-an ikut ambil bagian dalam operasi 'Pagar Betis'. Mereka menceritakan bahwa pada 1999 banyak pemuda dari desa mereka ditangkap dan disiksa di pos militer Maliana, kemudian direkrut dengan paksa untuk menjadi anggota milisi. Seperti kisah Oeleu, sejarah kekerasan Tapo juga berakhir dengan penderitaan para penduduk desa karena penyakit dan kelaparan di kamp-kamp pengungsi di Timor Barat.

Para peserta dari Leber menceritakan tentang ratusan rumah mereka yang dirampas dan dibakar pada Agustus 1975 oleh sekelompok pejuang Fretilin, termasuk orang-orang dari Tapo dan Oeleu. Menyusul invasi Indonesia pada Desember 1975, ratusan orang lari ke hutan-hutan dan desa-desa sekitar. Pada 1977 - 1978, sekitar 100 penduduk sipil Leber mati akibat kelaparan di gunung-gunung, dan

* Suatu bentuk operasi militer Indonesia, yang, dalam hal Timor-Leste, dilakukan untuk menumpas gerakan Resistansi di hutan-hutan. Untuk keterangan lebih lanjut tentang ini, lihat Bagian 3 tentang Operasi Keamanan (paragraf 354 – 376).

ratusan orang lagi mati karena serangan-serangan ABRI. Pada Mei 1982, semua penduduk sipil berumur 17 tahun ke atas ditangkap dan dipaksa melakukan operasi-operasi militer Indonesia, termasuk operasi 'Pagar Betis' yang berlangsung selama satu bulan. Selama operasi mereka tidak diberi makan dan harus mencari makan sendiri ketika mereka mencari para pejuang Fretilin di Gunung Ramelau dan di Manufahi, Ainaro, dan Atsabe. Penduduk Leber mengeluh bahwa mereka selalu dipersalahkan karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh ABRI. Pada 1990-an, beberapa pemuda desa bergabung dalam jaringan klandestin dan mengumpulkan uang dari sesama penduduk untuk membantu Falintil. Pada 1998, Pasukan Khusus menangkap enam pemuda dari Leber, membunuh seorang di antara mereka, dan menyiksa lainnya. Ketika TNI membentuk milisi Dadurus Merah Putih pada Mei 1999, banyak lagi pemuda Leber yang ditangkap, dipukuli, dan banyak rumah yang dihancurkan.

Tinjauan historis ini membantu para peserta menyadari bahwa tidak satu pun dari desa-desa itu yang pernah memiliki kesetiaan khusus kepada satu partai politik saja, dan bahwa semua telah menderita di tangan militer Indonesia. Semua telah menderita akibat pemindahan paksa yang berakibat pada bencana kelaparan dan penyakit; semua telah mengalami perekrutan dan evakuasi paksa dari rumah mereka; semua melaporkan adanya pemukulan dan penyiksaan oleh pasukan Indonesia; dan semua telah menyaksikan betapa para pemuda di desa mereka bergabung dengan militer Indonesia untuk menghancurkan komunitas mereka sendiri. Pola pelanggaran hak asasi manusia yang serupa satu sama lain ini menyodorkan pemahaman baru pada para penduduk desa mengenai masa lalu mereka serta memberi suatu cara untuk bergerak maju dengan lebih sedikit rasa permusuhan komunal antara satu sama lain.

[Kisah ini dikumpulkan dari Profil Komunitas CAVR Desa Oe-Leu, Tapo dan Leber Subdistrik Bobonaro, Distrik Bobonaro 24 November 2003.]

Partisipasi

200. Walaupun jenis peserta lokakarya Profil Komunitas beragam, yang selalu hadir ialah kepala desa, wakil-wakil partai politik, anggota organisasi pemuda dan perempuan, tetua masyarakat, pimpinan gereja setempat, orang-orang yang pernah aktif dalam gerakan klandestin, para korban, serta pelaku. Komisi berusaha mencari keseimbangan pandangan, walaupun terkadang tidak selalu berhasil.

201. Dari 297 lokakarya Profil Komunitas yang diperiksa, tiga di antaranya tidak mencatat jumlah orang yang hadir. 294 lainnya menunjukkan bahwa rata-rata

pertemuan dihadiri oleh 16 orang, yang berarti bahwa sekitar 4.700 orang di seluruh negeri telah ikutserta dalam lokakarya ini.

202. Rata-rata jumlah rata-rata laki-laki yang menghadiri lokakarya (76%) jauh lebih tinggi dari perempuan. Dalam 11,5% (31 dari 270) lokakarya yang dibuka baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, samasekali tidak dihadiri oleh peserta perempuan. Pada 24 pertemuan yang dikhususkan untuk perempuan, rata-rata diikuti oleh 15 orang peserta saja. Di dalam dua dari pertemuan khusus perempuan ini, beberapa laki-laki juga hadir dan ikut berbicara.

203. Semua tim distrik mencatat adanya ketidakseimbangan gender, baik dalam angka hadir maupun dalam partisipasi aktif di dalam diskusi. Alasan-alasan ketidakseimbangan ini di antaranya karena menurut tradisi perempuan memang tidak lazim ikut ambil bagian dalam pertemuan umum, dan karena beban kerja perempuan, khususnya tanggung jawab mengurus anak, menyebabkan kebanyakan perempuan harus selalu di rumah. Bahkan jika mereka hadir pun, banyak yang merasa tidak bisa berbicara di depan umum tentang kekerasan yang mereka alami, atau tidak merasa enak berbicara di depan suami-suami mereka.

204. Lebih mudah bagi perempuan untuk berbicara langsung tentang pelanggaran yang mereka alami, misalnya pemerkosaan, ketika tidak ada laki-laki yang hadir. Jika pelanggaran seksual harus dibicarakan dengan kehadiran laki-laki, biasanya ini dilakukan secara tidak terusterang, misalnya dengan mengatakan bahwa mereka telah dibikin rusak atau dinodai. Tim distrik membahas perihal ini secara formal dalam pertemuan khusus perempuan, dan terkadang secara informal oleh seorang fasilitator perempuan yang bertemu secara terpisah dengan para perempuan yang hadir pada lokakarya campuran.

205. Lokakarya khusus perempuan menjadi forum yang berharga untuk memahami pengalaman komunitas selama masa konflik, dan menunjukkan bahwa lokakarya-lokakarya semacam ini akan berguna.

Metode Profil Komunitas

206. Lokakarya berlangsung dalam waktu yang berbeda-beda, mulai dari beberapa jam sampai sehari penuh. Selama lokakarya, staf Dukungan Korban menggunakan kronologi sejarah, sketsa peta, dan diskusi kelompok sasaran untuk membantu anggota komunitas dalam memetakan pengalaman pelanggaran hak asasi manusia secara kronologis dan geografis.

207. Sebagian besar pembahasan dimulai dengan pengingatan kembali pada pelanggaran dari 1975-1999. Seorang fasilitator menjelaskan mengapa ia sering memulai diskusi dengan menyampaikan kepada peserta pertanyaan seperti: Di mana anda pada 1974-1975? Siapa yang memperkenalkan berbagai partai politik di desa anda? Mengapa anda dan tetangga anda memutuskan bergabung dengan partai ini atau partai itu? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan memicu diskusi lebih jauh, sehingga akan berlanjut pada ulasan sejarah yang umumnya dicatat sebagai naskah cerita dan bukan sekadar gambaran kronologi sejarah.

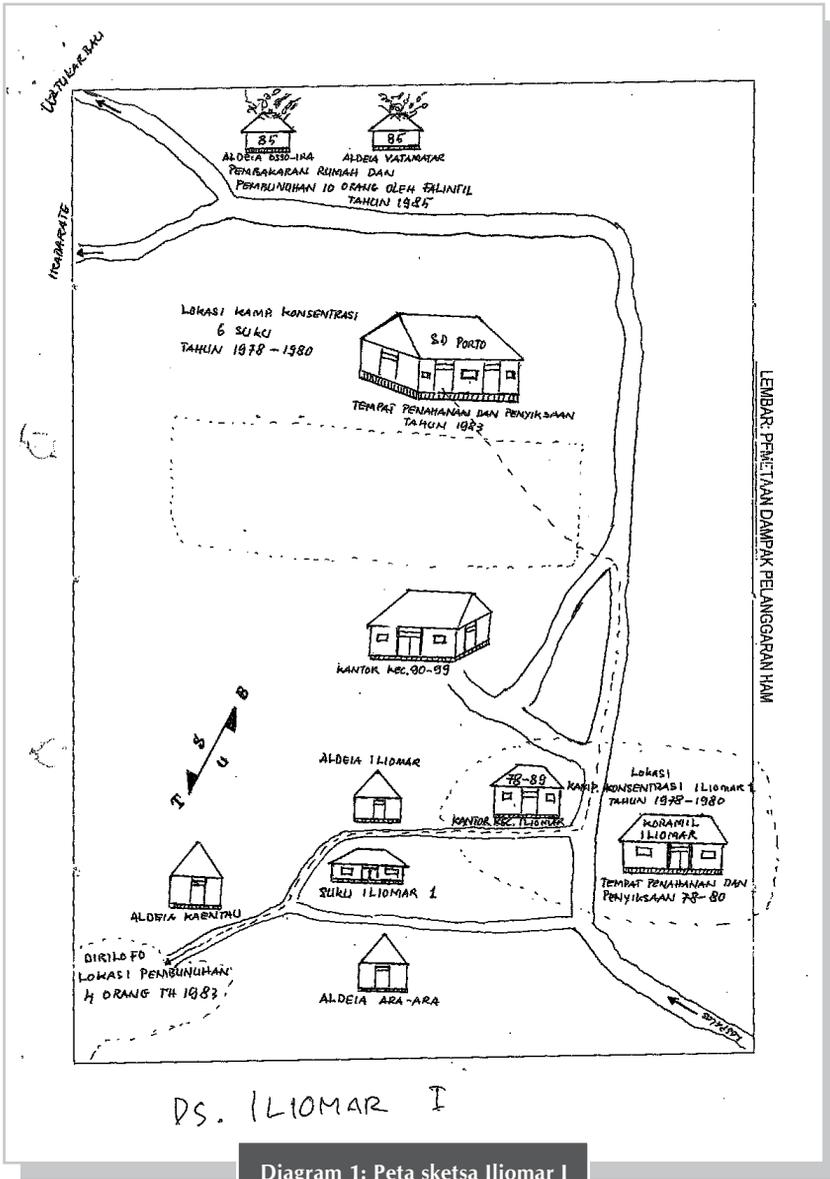
208. Pengalaman komunitas lebih lanjut diperjelas dengan membuat sketsa peta-peta. Kadang-kadang sketsa digambar secara garis besar oleh beberapa orang sebelum diskusi komunitas dimulai. Sebagai contoh, di Distrik Bobonaro, anggota tim dan kepala desa melakukan survei desa sebelum lokakarya dimulai, untuk membuat sketsa peta yang menunjukkan kawasan hutan, sawah dan ladang, pasar, gereja, klinik kesehatan, dan sekolah. Peta topografi/sosiologi kasar ini kemudian dipajang selama lokakarya untuk membantu anggota komunitas mengingat-ingat pelanggaran hak asasi manusia. Sementara para peserta menceritakan kisah tentang pelanggaran di komunitas mereka, yang sedikit-banyak dalam urutan kronologis, mereka kemudian diminta agar menunjukkan di peta di mana pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Ini membantu memberi konteks pada diskusi mengenai masalah-masalah tertentu. Cara seperti ini menghasilkan laporan-laporan Profil Komunitas yang cenderung bisa menggambarkan sejarah komunitas dengan lebih baik, ketimbang analisis tentang dampak sosial dan ekonomi dari pelanggaran terhadap komunitas.

209. Dengan mengajak komunitas dalam diskusi seperti ini pada permulaan kerja mereka, para Komisaris Regional dan staf akan bisa menumbuhkan saling pengertian dan kepercayaan. Selanjutnya dibantu dengan pelaksanaan kegiatan yang lain, seperti meminta pernyataan pribadi, audiensi rekonsiliasi komunitas, dan pekerjaan dukungan pada korban perorangan.

Peta sketsa

210. Salah satu aspek penting dari lokakarya ialah pembuatan peta-peta sketsa. Peta-peta yang terkadang digambar oleh peserta lokakarya dan terkadang oleh staf distrik Komisi itu berguna untuk merekam pelanggaran serta membangkitkan ingatan terhadap kejadian-kejadian tersebut. Peta-peta ini menjadi alat yang sangat berguna untuk memancing diskusi di antara anggota komunitas dengan kemampuan baca tulis yang rendah. Peta-peta ini juga menyingkap teror berkepanjangan yang dialami banyak komunitas selama 24 tahun.

211. Beberapa peta menggunakan kode warna untuk membedakan kejadian-kejadian dan dampak yang diakibatkan. Sebagai contoh, pada beberapa peta pos-pos Falintil ditandai dengan bendera kuning dan putih, sehingga mudah dibedakan dengan pos-pos ABRI/TNI yang berbendera merah putih. Salib merah jambu untuk menandai tempat-tempat orang yang dibunuh oleh ABRI/TNI, dan salib biru untuk menandai tempat-tempat orang yang mati akibat kelaparan dan penyakit, atau untuk jumlah angka kematian ditandai dengan menggunakan penanda berwarna merah jambu atau merah (lihat Peta Sketsa 11 di bawah ini). Beberapa peta mengutamakan pada kejadian-kejadian selama kurun waktu satu atau dua tahun, sedangkan untuk yang berkurun waktu lebih lama diperlihatkan dengan cara yang lain. Sebagai contoh, Peta Sketsa Iliomar I (Iliomar, Lautém) menggunakan anotasi untuk mencatat informasi tentang periode, sedangkan Peta Sketsa Pairara Moro (Lautém) menambahkan tanda-tanda panah untuk menandai pelanggaran-pelanggaran di tempat yang sama tapi dalam saat-saat yang berbeda dalam sejarah.



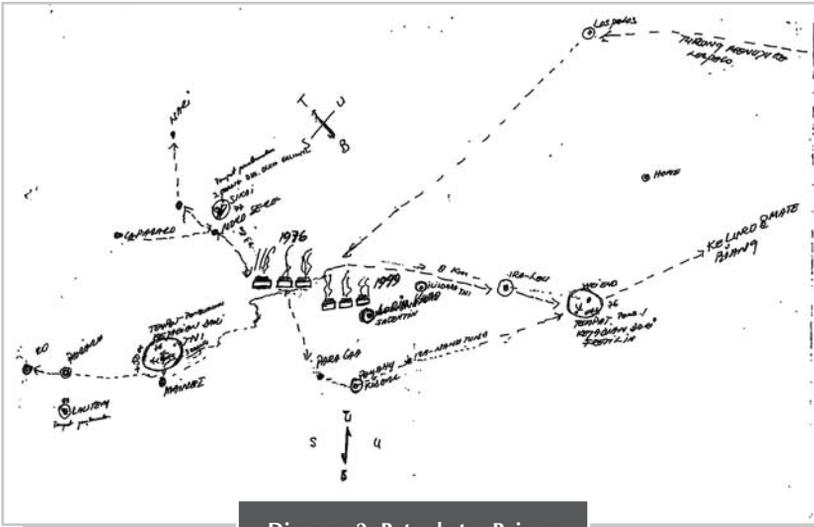


Diagram 2: Peta sketsa Pairara

212. Komunitas-komunitas lain menjangkau jarak waktu yang panjang dengan membuat lebih daripada satu peta. Jika diletakkan berjejer, sketsa peta-peta 3 dan 4 dari lokakarya komunitas di Beco 2/Tasilin (Zumalai, Covalima) dengan jelas memperlihatkan pergolakan yang dialami komunitas ini, yaitu pada awal dan akhir pendudukan Indonesia, dalam 1975 dan 1999. Peta 1977 memperlihatkan tank militer yang bergerak memasuki kawasan; peta 1999 memperlihatkan truk-truk pengungsi yang dievakuasi ke Atambua. Kedua peta itu memperlihatkan tentara bersenjata, rumah-rumah yang terbakar, dan penduduk desa yang melarikan diri ke gunung-gunung.

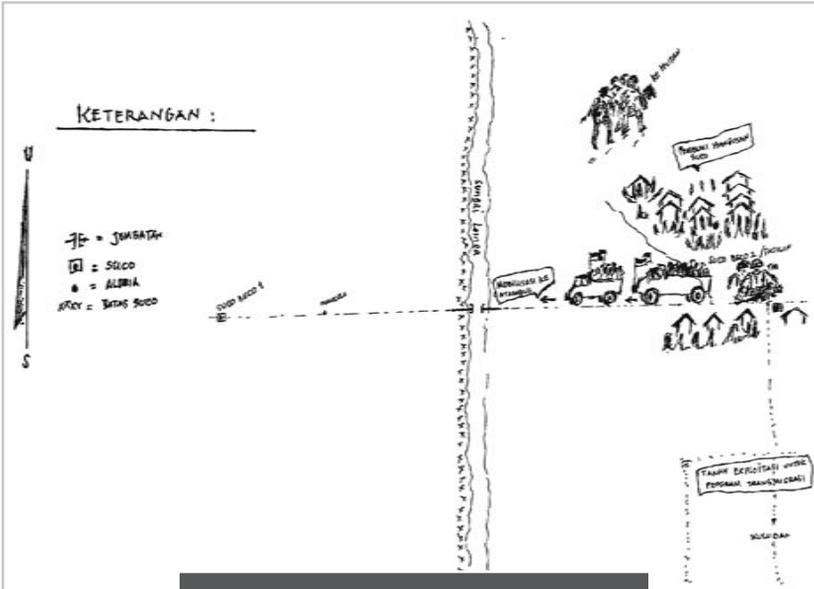


Diagram 3: Peta sketsa Beco 2/Tasilin 1977

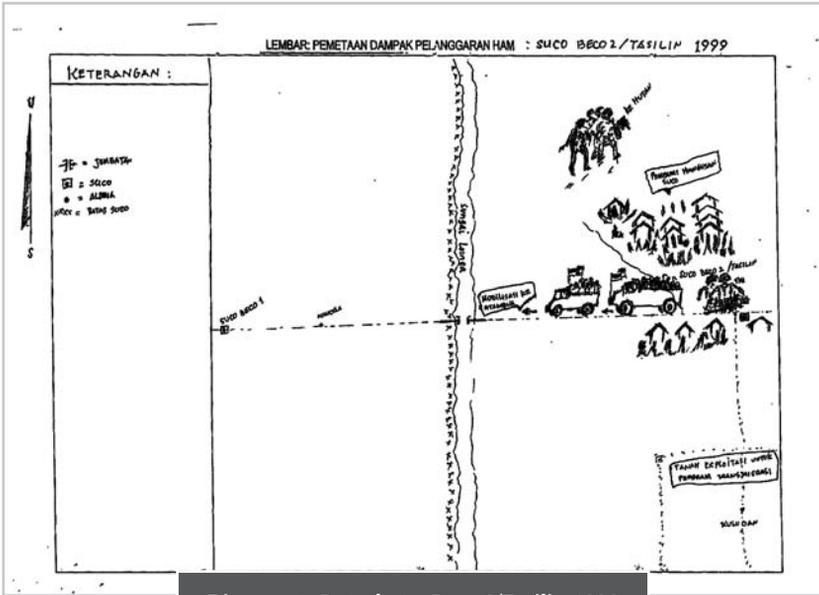


Diagram 4: Peta sketsa Beco 2/Tasilin 1999

213. Sketsa peta desa Guda (Lolotoe, Bobonaro) dan sketsa peta Osso-Huna (Baguia, Baucau) memperlihatkan dua pengeboman dari udara terhadap desa dan penduduk desa yang bersembunyi di gunung-gunung.

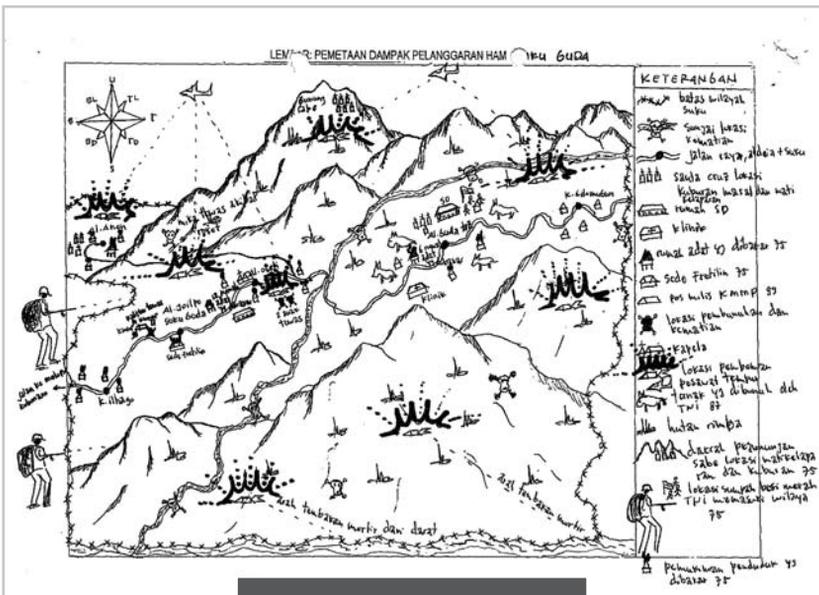


Diagram 5: Peta sketsa Guda

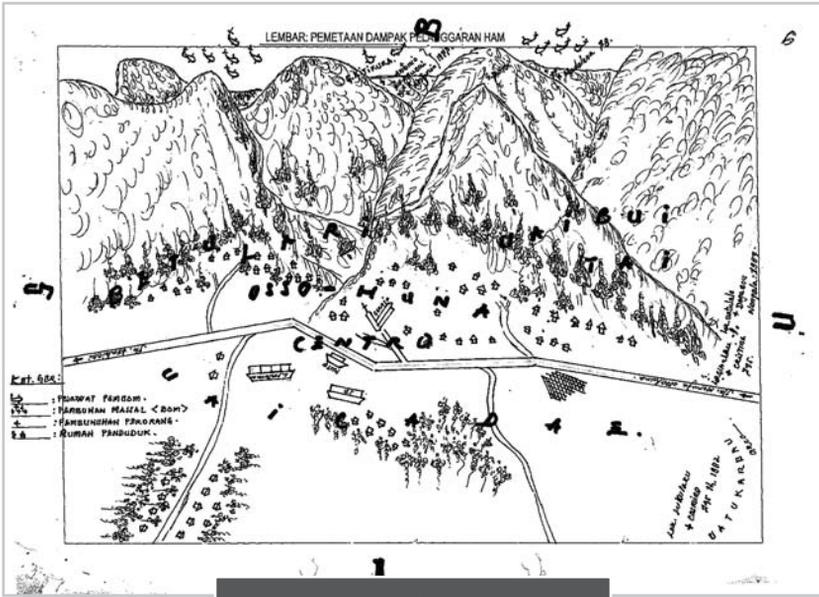


Diagram 6: Peta sketsa Osso-Huna

214. Beberapa peta memperlihatkan jumlah korban dengan cara memberikan anotasi dan sisipan-sisipan salib, seperti pada Peta sketsa Uaitame (Quelicai, Baucau). Namun yang lebih lazim adalah penyisipan gambar tengkorak atau tulang bersilang, cara sederhana untuk menyatakan besarnya trauma dengan pengulangan gambar yang sama, seperti tampak pada Peta sketsa Caimauk (Turisca, Manufahi), Peta sketsa Ura-Hoci (Hatolia, Ermera), dan Peta sketsa Mahaklusin (Alas, Manufahi).

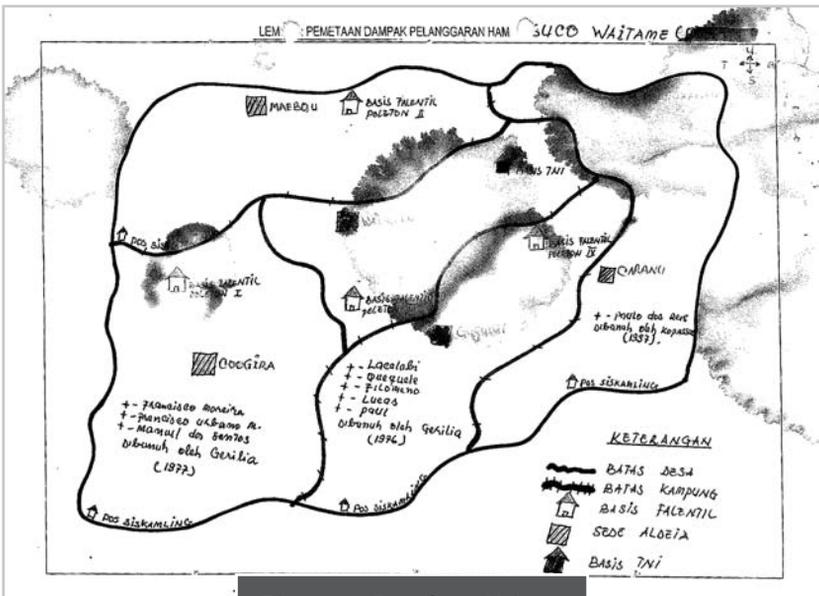


Diagram 7: Peta sketsa Uaitame

LEMBAR PEMETAAN DAMPAK PELANGGARAN HAM

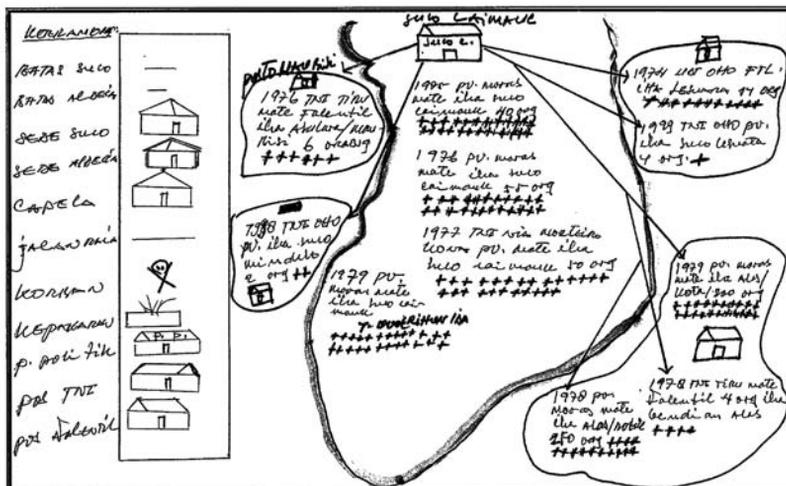


Diagram 8: Peta sketsa Caimauk

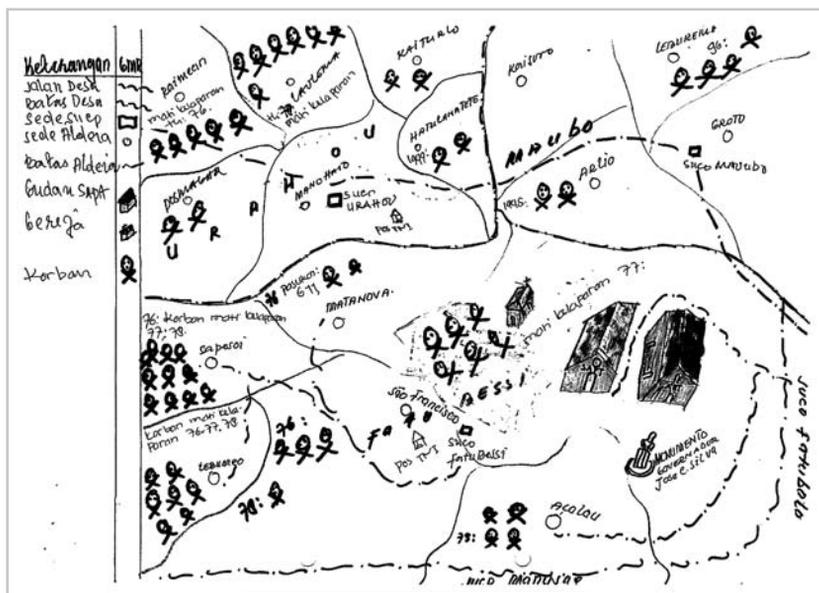


Diagram 9: Peta sketsa Ura-Hoci

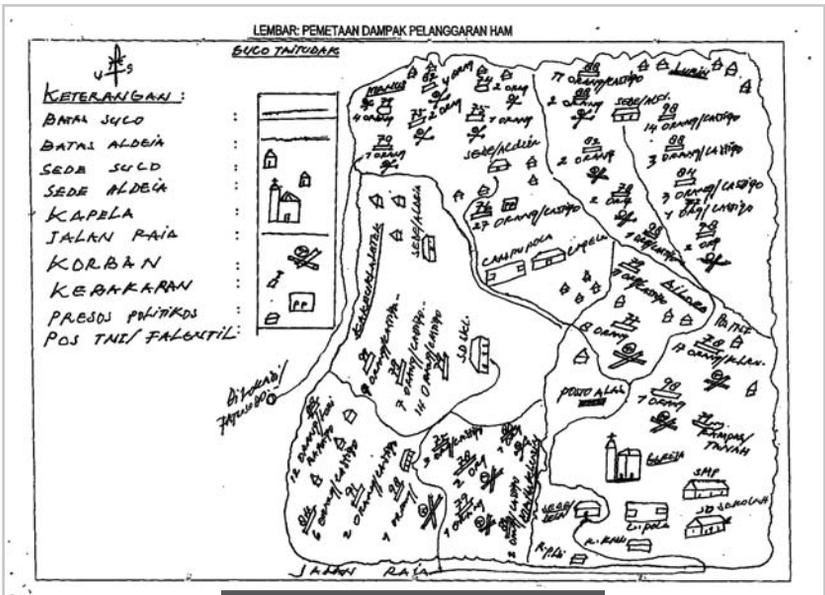


Diagram 10: Peta sketsa Mahaklusin

215. Bila dikumpulkan, peta-peta sketsa yang dibuat oleh panitia pertemuan-pertemuan komunitas itu berkisar mulai dari peta-peta yang sangat belum sempurna seperti peta sketsa Rasa (Lospalos, Lautém) sampai peta sketsa Miligu (Cailaco, Bobonaro) yang sangat lebih terperinci dan peta-peta seperti peta sketsa Taiboco (Pantai Makasar, Oecussi), yang memetakan jalannya pelanggaran-pelanggaran. Semua peta sketsa ini memberikan gambaran visual yang dapat menangkap dampak kolektif pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste dari 1974 sampai 1999.

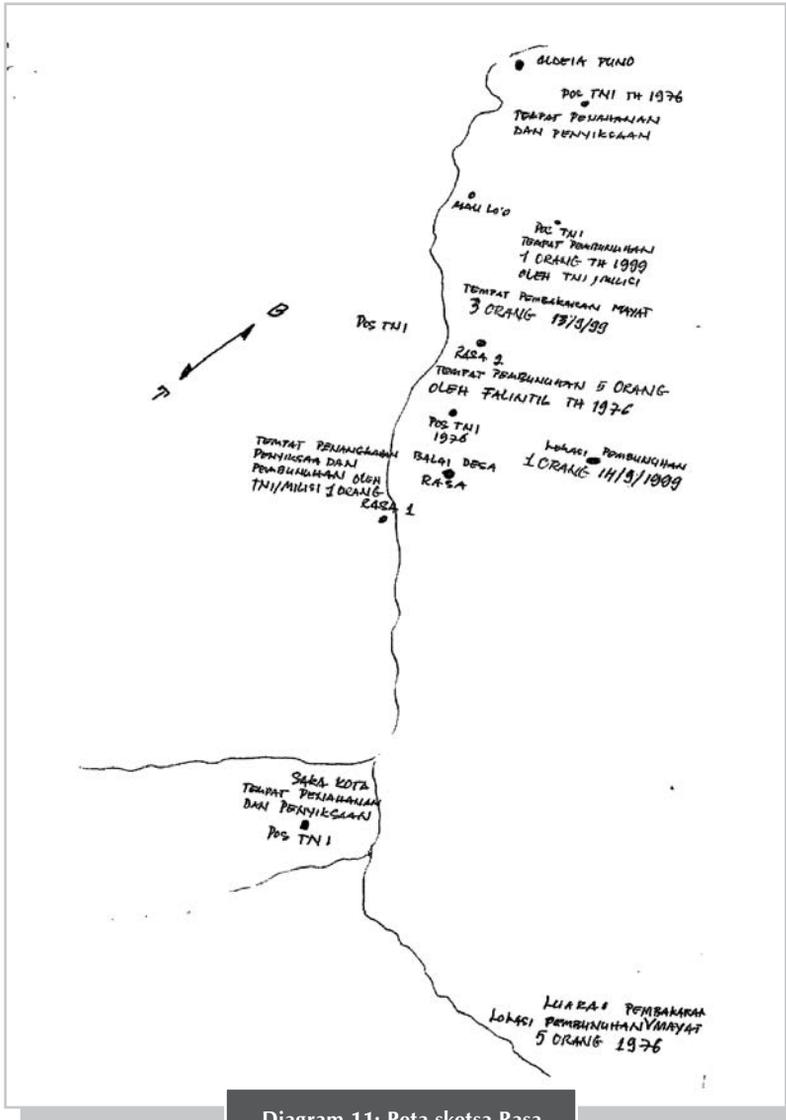


Diagram 11: Peta sketsa Rasa

216. Peta sketsa 14: Beidasi (Fatululik, Covalima) merupakan pengingat bahwa meskipun pelanggaran di Timor-Leste begitu meluas dan mendalam, dampaknya pada komunitas-komunitas setempat tidak pernah tak bernama. Ketajaman peta itu bisa ditangkap melalui nama-nama yang ditulis pada setiap rumah, yang memberi identitas tentang kepemilikan, tempat kediaman, dan komunitas. Yang mencolok adalah penjaran antara berbagai komunitas ini, di mana setiap orang saling mengenal dan berhubungan, dan beberapa anotasi pendek—“Veronica mati di sini” di samping dua salib hitam dan merah jambu, untuk menunjukkan bahwa ia dibunuh oleh milisi; “82 orang dibunuh TNI” tertulis di bawah salib merah jambu; dan “30 anak mati” ditulis di atas salib hitam, untuk menunjukkan kematian akibat kelaparan. Ia mengubah peta lingkungan biasa menjadi suatu dokumen yang mencatat sejarah kekerasan dan penderitaan di masyarakat: selama bertahun-tahun, pelanggaran telah terjadi pada rumahtangga Alberto dan Carlos, Martinho dan Mauseu, dan pada begitu banyak pribadi dan keluarga lainnya.

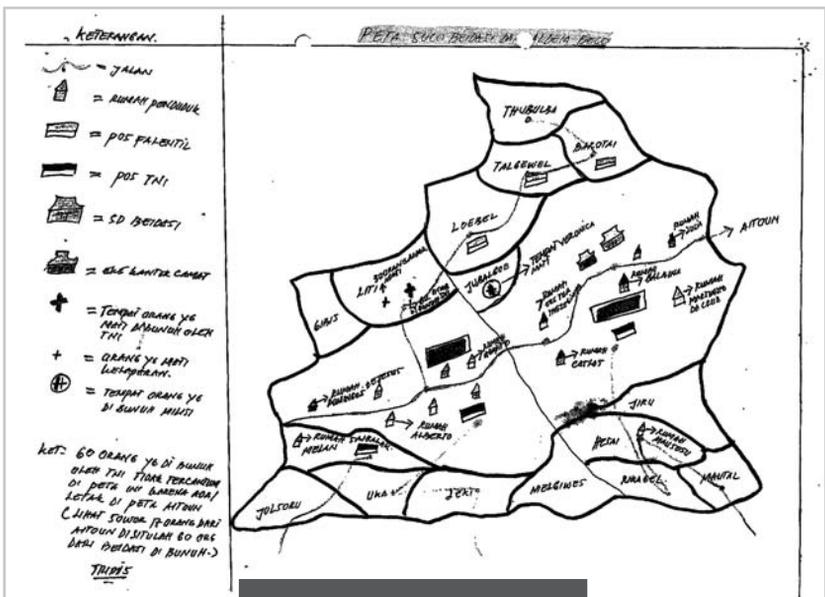


Diagram 14: Peta sketsa Beidasi

Dampak

217. Lokakarya Profil Komunitas memberikan pada banyak komunitas desa rasa hormat dan pengakuan, melalui mendengarkan dan mencatat pengalaman-pengalaman mereka sebagai bagian dari proses resmi penyampaian kebenaran yang berlangsung secara nasional.

218. Semua tim distrik melaporkan umpan balik yang positif dari komunitas-komunitas desa, yang berterimakasih untuk kesempatan berbicara tentang pengalaman-pengalaman mereka selama masa konflik. Karena diskusi-diskusi itu lebih bersifat komunal ketimbang pribadi, saat-saat katarsis atau perenungan tentang masa lalu menjadi bagian dari pengalaman komunitas, seperti halnya yang terjadi dalam audiensi korban.

219. Lokakarya tidak memberikan data-data empiris untuk dijadikan tabel dan dianalisis sedemikian rupa yang memungkinkan penyusunan perbandingan regional. Nilai bahan yang terkumpul dari lokakarya-lokakarya ini ialah pada perincian dan fokusnya yang bersifat lokal. Kelemahan dalam hal informasi mencakup kenyataan bahwa komunitas sering tak dapat memberi angka statistik yang akurat mengenai jumlah orang yang mati akibat kelaparan atau dalam serangan-serangan militer besar yang telah samasekali merusak kehidupan komunitas itu. Tanggal-tanggal kejadian tidak selalu spesifik atau akurat, dan angka-angka tentang harta kekayaan, misalnya ternak yang musnah, sering merupakan angka pukul-rata saja. Selanjutnya, kisah-kisah yang diceritakan bergantung pada peserta yang hadir—yaitu umur mereka, dan demikian derajat keandalan dan luasnya ingatan, taraf melek-huruf, gender, dan juga pertalian politik mereka. Misalnya, jika sebagian besar peserta ialah anggota partai tertentu, hal ini akan menjadi kendala dalam diskusi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh partai tersebut.

220. Apa pun kekurangannya sebagai sarana untuk mencari kebenaran, pada akhirnya Profil Komunitas dapat memberikan liputan luas tentang pengalaman komunitas selama rentang waktu 24 tahun konflik politik. Tapi, Profil Komunitas sering memberikan jauh lebih banyak daripada itu, yaitu dengan memberi wawasan tentang dampak terhadap komunitas, baik dampak dari gejala-gejala umum seperti pemindahan massal dan pencarian tenaga pasukan secara paksa, maupun dari peristiwa-peristiwa khusus seperti pemberontakan Mau Chiga dan pembantaian di Kraras dan Santa Cruz, seperti juga halnya dari banyak peristiwa lainnya yang sampai sekarang, di luar kawasan tempat peristiwa itu terjadi, belum diakui.

Pelajaran yang dapat dipetik

Penerimaan (*Acolhimento*), orang-orang yang kembali, dan Timor Barat.

221. Aktor-aktor negara dan non-negara di Timor-Leste harus terus-menerus bekerjasama dengan orang Timor-Leste di Timor Barat. Pekerjaan ini harus

difokuskan pada pengembangan rasa saling percaya dan saling pengertian, berbagi informasi, dan membantu mereka yang memutuskan kembali ke Timor-Leste. Pekerjaan ini dapat dilaksanakan hanya kalau ada kerjasama antara orang Timor Leste dan lembaga-lembaga negara dan non-negara Indonesia. Satu unsur terpenting untuk mengembangkan saling percaya antara orang Timor-Leste di Timor Barat adalah bahwa hubungan antara orang Timor-Leste di kedua sisi perbatasan seharusnya tidak meresahkan tetapi menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap kebutuhan mereka.

222. Pekerjaan Komisi dengan orang Timor Leste di Timor Barat menunjukkan kontribusi kepada proses yang telah dimulai sebelum Komisi didirikan, dan akan berlanjut setelah amanat Komisi selesai. Walaupun dukungan dari masyarakat internasional sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini, dukungan tersebut tidak akan diterima tanpa adanya komitmen yang jelas dan tinggi dari Pemerintah Timor-Leste terhadap pekerjaan ini.

223. Pekerjaan apapun menyangkut hal ini di masa depan harus memberi perhatian kepada beberapa masalah yang sulit. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah:

- Mencari cara untuk berbicara kepada para pengungsi tentang rekonsiliasi dengan cara yang konstruktif. Salah satu halangan kepada pembicaraan yang berguna adalah jurang antara yang melihat rekonsiliasi sebagai isu politik yang berkaitan dengan amnesti atas kejahatan-kejahatan yang dilaksanakan pada masa lalu, dan mereka yang melihatnya sebagai isu sosial berkaitan dengan pemulihan dari perpecahan antara perseorangan dan komunitas. Kenyataan bahwa hierarki kekuasaan di Timor Barat sudah memperkuat perbedaan-perbedaan paham ini membuat perbedaan-perbedaan itu sangat sulit dihilangkan.
- Terus-menerus mencari cara untuk mengatasi halangan-halangan bagi para perempuan untuk berpartisipasi secara penuh di dalam proses pengambilan keputusan tentang masa depan mereka dan masa depan keluarga mereka.
- Membangun kemitraan, pengalaman, dan keinginan baik yang telah dibangun dengan orang Indonesia, pemerintah, dan organisasi-organisasi nonpemerintah Indonesia.

224. Masih dibutuhkan dukungan terus-menerus untuk menyatukan kembali mereka yang akan pulang dan komunitas yang menerima mereka. Penyatuan kembali bukanlah proses yang segera tetapi membutuhkan perhatian dan dukungan secara tetap selama jangka waktu yang panjang. Kepercayaan satu sama lain dan rasa percaya diri hanya akan kembali sedikit demi sedikit. Walaupun banyak dari pekerjaan-pekerjaan penyatuan kembali sangat penting dilaksanakan oleh para individu, para keluarga, dan komunitas yang melaksanakan, dengan bantuan dari lembaga setempat seperti Gereja dan pemuka adat, pengalaman Komisi di dalam bidang ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat dibantu dengan dukungan dari lembaga nasional terpercaya dan dihormati.

Reparasi-reparasi mendesak

225. Program Reparasi Mendesak Komisi telah membantu banyak para korban yang paling dirugikan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendesak. Skema ini menawarkan bantuan baik finansial maupun bukan finansial kepada individu dan komunitas. Lewat pekerjaan ini, Komisi memperoleh pengertian yang jernih tentang kekuatan dan kelemahan dari jenis-jenis skema reparasi yang berbeda-beda dalam konteks Timor-Leste, dan oleh karena itu merekomendasikan pendekatan yang lebih menyeluruh.

226. Komisi mengerti bahwa Skema Reparasi Mendesak merupakan tindakan sementara yang tidak dapat dianggap sebagai pengganti program jangka panjang yang lebih menyeluruh.

227. Komisi yakin bahwa ada kebutuhan yang sangat mendesak akan sebuah program reparasi yang menyeluruh dan mempunyai berbagai segi untuk dimatangkan setelah tugas Komisi berakhir. Program ini harus memusatkan perhatian kepada kebutuhan para korban dengan menawarkan pengakuan resmi terhadap para korban dengan memelihara dan menghormati ingatan akan mereka, dan penyediaan pelayanan sosial dan bantuan ekonomi. Program itu harus diberikan pada tingkat perorangan dan masyarakat.

228. Komisi telah menyadari bahwa sulit untuk mendapatkan dukungan finansial untuk sebuah skema reparasi, baik dari sumber-sumber dana nasional maupun internasional. Para politikus, pengambil kebijakan, dan mereka yang berada dalam posisi menyediakan dana sangat sering menggolongkan program-program reparasi dalam wilayah pembangunan nasional secara umum. Reparasi tidak seharusnya diperlakukan demikian: reparasi memainkan peran melengkapi pembangunan nasional, tetapi juga agak berbeda karena reparasi merupakan dasar untuk memberi keadilan dan perlindungan atas hak asasi manusia dalam masyarakat pasca-konflik ini. Masalah ini dibahas secara lebih menyeluruh di dalam Bagian: 11 Rekomendasi.

Para korban

229. Dalam bekerja dengan para korban selama tiga tahun keberadaan Komisi, Komisi telah belajar banyak. Kekuatan dan ketabahan banyak korban, martabat dan kebaikan hati terhadap sesama manusia, dan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam membentuk negara merdeka baru, sungguh menginspirasi. Kehidupan keluarga dan komunitas dan kebudayaan orang Timor kadang dapat membantu menopang dan memulihkan para korban. Di waktu lainnya, keluarga, komunitas, dan kebudayaan ini justru menjadi rintangan bagi pemulihan. Komisi juga telah memahami dengan jelas bahwa sekarang ini banyak orang yang hidup dalam keadaan susah akibat kekerasan yang pernah mereka alami. Sekali mereka memperoleh kadar rasa aman tertentu, baik itu rasa aman secara fisik, mental, maupun ekonomi, individu, keluarga, dan komunitas dapat berbuat banyak untuk membantu pemulihan mereka. Tetapi mereka juga terkadang memerlukan bantuan

pihak luar, seperti layanan kesehatan fisik dan mental, pendidikan dan pelatihan, bantuan untuk memulihkan kelangsungan ekonomi, pengakuan dan perasaan bahwa negara memperhatikan kesejahteraan mereka.

230. Kesehatan, termasuk kesehatan mental, adalah hal yang utama untuk pekerjaan dukungan pada korban di masa mendatang. Pengalaman kekerasan dan kehilangan dapat memiliki dampak mendalam bagi kesehatan mental dan kesejahteraan para korban. Lokakarya pemulihan merupakan upaya untuk memahami lebih banyak mengenai kebutuhan para korban dalam hal ini, untuk memberikan dukungan, untuk mengantar orang-orang kepada layanan-layanan khusus jika tersedia. Komisi juga bekerja dengan komunitas gabungan dan tim kesehatan mental dari Universitas New South Wales, Australia, untuk mengembangkan peninjauan awal atas kebutuhan para korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kaitannya dengan temuan-temuan Komisi yang berkenaan dengan kesehatan dan kesejahteraan mental.

231. Komisi menemukan bahwa banyak korban pelanggaran berat hak asasi manusia terus-menerus menderita karena perlakuan kejam yang mereka alami. Komisi telah menemui korban dengan peluru di dalam tubuh mereka, luka-luka yang belum sembuh, tulang-tulang yang tidak dipulihkan secara benar, masalah ginekologis akibat pemerkosaan, dan macam-macam kecacatan fisik yang diakibatkan oleh penyiksaan yang berkepanjangan atau berulang kali. Tanpa perhatian kepada kebutuhan kesehatan ini, para korban tidak akan mampu mengambil tempat mereka yang sah sebagai warga negara aktif Timor-Leste.

232. Temuan-temuan ini menggarisbawahi perlunya peninjauan yang menyeluruh yang dapat menjadi dasar program dukungan kesehatan yang akan menjadi bagian dari skema Reparasi yang mendatang.

233. Komisi memperhatikan bahwa ada kelompok tertentu dalam komunitas yang tampak begitu rentan dalam menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan mental mereka. Ini bukan semata-mata isu-isu medis mengenai gangguan mental, melainkan kesejahteraan mental yang seluas-luasnya, yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang baik dan berarti. Keadilan, belas kasih, dan pencarian akan masyarakat yang adil dan inklusif menuntut langkah-langkah untuk memulihkan kesejahteraan mental dan fisik kepada para korban yang telah kehilangan hal itu akibat dari penganiayaan. Kelompok-kelompok yang dicatat oleh Komisi sebagai kelompok yang berisiko tinggi, dan yang harus menjadi fokus untuk program di masa mendatang, diuraikan di bawah ini:

Survivor pemerkosaan

234. Melalui lokakarya pemulihan dan kegiatan-kegiatan lain menjadi jelas bahwa perempuan yang mengalami perkosaan sangat besar kemungkinannya menderita trauma dibanding korban pelanggaran lainnya. Sedikit-banyak mungkin hal ini disebabkan oleh karena banyak perempuan yang diperkosa atau dipaksa ke dalam situasi menjadi budak-budak seks oleh tentara Indonesia, melaporkan bahwa mereka dijauhi oleh keluarga dan masyarakat mereka, dan sebagai akibatnya kehilangan

bantuan yang diperlukan untuk pemulihan dan kesehatan mental. Penderitaan perempuan yang melahirkan akibat pemerkosaan atau dipaksa menjadi budak seks, lebih menyedihkan lagi. Ada beberapa komunitas, misalnya Suai, di mana banyak perempuan menjadi sasaran perkosaan massal sesudah Jajak Pendapat 1999, dan banyak di antara mereka benar-benar memerlukan bantuan.

235. Komisi menemukan bahwa secara umum, perempuan muda, umumnya yang diperkosa selama kekerasan 1998-1999, menderita lebih parah dan menunjukkan lebih banyak gejala trauma dibanding dengan para korban yang mengalami perkosaan pada periode-periode sebelum konflik. Penjelasan untuk perbedaan ini barangkali karena perempuan korban yang berumur lebih tua sering lebih bisa bergantung kepada bantuan yang disebabkan oleh peran mapan mereka sebagai anggota keluarga dan komunitas, sedangkan pelanggaran yang diderita oleh perempuan muda agaknya justru menjadi penghalang untuk mengembangkan peran yang demikian itu. Pada saat yang sama, kelompok perempuan yang lebih tua umumnya lebih enggan membicarakan pengalaman mereka dan karena itu, bila mereka membutuhkan bantuan, mereka memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk menerimanya.

Pemuda, terutama yang di daerah perkotaan

236. Di dalam konflik politik di Timor-Leste, banyak lelaki muda yang terlibat dalam kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku. Munculnya gerakan klandestin khususnya pada 1980-an menyebabkan banyaknya pemuda yang terlibat dalam kegiatan Resistansi. Pemuda-pemuda lain terlibat dalam kelompok-kelompok yang dibentuk oleh militer Indonesia untuk menghadapi kegiatan Resistansi tersebut. Pendidikan mereka sering terhambat akibat keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan klandestin, masuk penjara, dan luka parah akibat siksaan dan kekejaman yang mereka alami.

237. Banyak di antara pemuda yang berumur belasan tahun pada 1990-an itu, sekarang dalam umur duapuluh atau awal tigapuluh. Akibat kurangnya pendidikan dan pelatihan, banyak di antara mereka yang sekarang merasa tersisih dari kesempatan di Timor-Leste baru. Berbeda dari kaum perempuan muda yang biasanya mempunyai peranan sosial sebagai pengurus rumahtangga dan keluarga, kaum laki-laki muda kebanyakan hidup terpinggirkan dalam masyarakat. Komisi melihat adanya rasa marah dan kekecewaan di kalangan banyak laki-laki muda korban. Isolasi mereka diperburuk oleh batasan budaya, yang merintangi laki-laki meminta bantuan atau bicara tentang soal-soal perasaan. Kurangnya kesempatan kerja dan pendidikan memperparah kesulitan mereka.

238. Soal-soal tersebut di atas menempatkan banyak laki-laki muda dalam risiko mendapat masalah kesehatan mental. Ditambah dengan pengalaman kekerasan mereka yang intens pada tahun-tahun remaja mereka, hal itu menimbulkan masalah stabilitas rumahtangga dan sosial. Orang-orang muda seperti inilah yang harus menjadi prioritas utama untuk bantuan di masa depan.

Laki-laki cacat tengah-baya

239. Komisi melihat banyak korban laki-laki tengah baya dengan “tubuh yang rusak” akibat penyiksaan atau pemukulan hebat yang berulang-ulang. Terutama pada orang-orang desa yang penghidupannya bergantung pada kemampuan menggarap tanah, cacat tubuh seperti itu berakibat pada buruknya kondisi ekonomi. Banyak dari mereka yang menyatakan kesusahan dan memperlihatkan ketegangan jiwa karena tidak lagi mampu menghidupi keluarga, dan hal ini akan berdampak pada pendidikan anak-anak serta kesempatan masa depan mereka. Tidak bisa memenuhi tugas sosial mereka sebagai penopang keluarga, banyak di kalangan laki-laki ini menjadi rentan terhadap problem kesehatan mental.

Eks-tahanan politik dan korban siksaan

240. Komisi berulang-ulang mendengar bagaimana tentara keamanan Indonesia terus-menerus menyiksa para tawanan. Komisi juga mendengar tentang penyiksaan dan kekejaman yang dilakukan dalam tahun-tahun awal konflik oleh partai-partai politik Timor-Leste. Akibat-akibat psikososial siksaan itu dicatat dengan baik. Komisi bekerja erat dengan banyak eks-tapol dan korban penyiksaan. Pada beberapa kasus, eks-tapol memperlihatkan kemampuan mereka sendiri dalam mengatasi ketegangan pascatrauma. Tetapi, Komisi juga mendengar dari banyak eks-tapol lainnya bahwa mereka tetap memendam dalam-dalam penderitaan di hati mereka. Sementara dalam hidup mereka sehari-hari mereka memperlihatkan kemampuan mengatasi, namun mereka tetap merasa menderita. Beberapa korban berkata kepada Komisi bahwa perasaan mereka yang mendalam itu kadang-kadang meluap dalam bentuk kekerasan terhadap keluarga. Para bekas tahanan ini merupakan kelompok dengan risiko tinggi yang semestinya dibantu dalam program-program mendatang.

Korban dan keluarga korban kekerasan Fretilin/Falintil

241. Komisi mendengar tentang keengganan orang bicara sekitar kekerasan yang dilakukan partai-partai politik Timor-Leste, terutama tentang konflik intern 1975, dan akibat perbedaan politik dalam tubuh Fretilin pada 1970-an. Banyak korban atau keluarga dari orang-orang yang terbunuh atau hilang menyatakan keinginan untuk membersihkan nama anggota keluarga dan teman-teman. Kurangnya pengakuan terhadap kekerasan dan kehilangan yang diderita keluarga, serta ketidakadilan perlakuan mereka, telah mengakibatkan tekanan perasaan yang dalam dan terkucilnya golongan orang-orang seperti ini. Tanpa pengakuan publik bahwa peristiwa itu telah terjadi, sulit bagi mereka yang menderita untuk tampil mencari bantuan yang mungkin mereka perlukan.

Masa depan

242. Pola-pola atau penggolongan-penggolongan tersebut tidak bersifat menyeluruh, dan tidak dimaksud untuk mengecilkan korban perorangan dan pengalaman serta kebutuhan komunitas yang tidak dapat dimasukkan ke dalam penggolongan ini.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa terdapat kelompok-kelompok tertentu dalam komunitas orang Timor yang membutuhkan bantuan. Penilaian luas tentang keperluan mereka seharusnya dilaksanakan sebelum sebuah program reparasi dibuat. Juga sangat penting bahwa pemerintah, LSM Timor-Leste, dan lembaga masyarakat sipil yang lain, organisasi agama, serta lembaga internasional dan para pemberi dana, terus-menerus memberi dukungan dan melanjutkan usaha memulihkan penderitaan para korban pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan pelajaran yang telah kami dapat melalui kerja kami dengan para korban pelanggaran hak asasi manusia, Komisi telah mengembangkan Skema Reparasi yang diuraikan di dalam Bagian 11: Rekomendasi.

Catatan akhir

1. CAVR, wawancara dengan Manuel Cárceres, asisten repatriasi/proteksi UNHCR, Dili, 25 November 2002.
2. Ibid
3. Ibid
4. Arsip CAVR
5. Wawancara CAVR Iria Moniz, Desa Ilat Laun, Bobonaro, Bobonaro 19 Desember 2003.
6. Arsip CAVR



Chega!

Bagian 11.

Rekomendasi

Bagian 11. Rekomendasi

2861 | Pendahuluan

2864 | Rekomendasi-rekomendasi

- 2864 | Timor-Leste dan masyarakat internasional
- 2866 | Timor-Leste dan Portugal
- 2867 | Hak asasi manusia Timor-Leste: memajukan dan melindungi semua hak bagi setiap orang
 - 2867 | Hak untuk hidup, untuk bebas dari kelaparan dan atas standar hidup yang memadai
 - 2868 | Hak keamanan pribadi
 - 2870 | Hak atas keamanan pribadi: sebuah komitmen nasional melawan kekerasan
 - 2871 | Hak untuk berpartisipasi - menjamin hak-hak dasar
 - 2872 | Hak untuk berpartisipasi - kewarganegaraan
 - 2873 | Hak atas pendidikan dan hak penentuan budaya sendiri
 - 2874 | Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan
- 2875 | Hak asasi manusia di rumah: memajukan dan melindungi hak mereka yang rentan
 - 2875 | Perempuan
 - 2878 | Anak dan pemuda
- 2879 | Hak asasi manusia di Timor-Leste: memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia melalui lembaga-lembaga yang efektif
 - 2879 | Masyarakat sipil yang berfungsi secara efektif
 - 2880 | Parlemen Nasional yang efektif
 - 2881 | Sebuah sistem peradilan yang efektif
 - 2883 | Aparatur pemerintah yang efektif
 - 2884 | Ombudsman yang efektif
 - 2885 | Komunitas Gereja yang efektif
- 2886 | Hak asasi manusia di Timor-Leste: pelayanan keamanan yang melindungi dan memajukan hak asasi manusia
 - 2886 | Sebuah kebijakan keamanan
 - 2887 | Kepolisian
 - 2888 | Angkatan Bersenjata
 - 2889 | Badan-badan keamanan lain
- 2890 | Keadilan dan kebenaran
 - 2891 | Keadilan untuk pelanggaran dari masa lalu
 - 2895 | Pengadilan Internasional
 - 2895 | Komisi Kebenaran dan Persahabatan
 - 2896 | Penyebaran Laporan Akhir di Timor-Leste
 - 2896 | Arsip-arsip CAVR

- 2898 | Rekonsiliasi
 - 2899 | Rekonsiliasi dalam masyarakat umum
- 2900 | Rekonsiliasi dalam kalangan politik di Timor-Leste
- 2902 | Rekonsiliasi dengan Indonesia
 - 2902 | Kebenaran sebagai dasar hubungan
 - 2902 | Mengakui korban yang gugur di antara militer Indonesia dan membantu mereka dan keluarga-keluarganya
 - 2903 | Membukakan semua dokumentasi berkaitan dengan operasi militer yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil
 - 2904 | Perdamaian dan stabilitas
 - 2904 | Membersihkan nama mereka yang telah salah dituduh
 - 2905 | Reparasi
- 2905 | *Acolhimento* (Penerimaan)
 - 2906 | Anak-anak yang terpisah
- 2906 | Reparasi
 - 2907 | Pendahuluan
 - 2908 | Reparasi dalam bentuk apa?
 - 2908 | **Boks: Beberapa bentuk reparasi**
 - 2909 | Landasan hukum dan moral bagi reparasi
 - 2910 | **Konteks Timor-Leste**
 - 2910 | Kontribusi Komisi
 - 2911 | Rekonsiliasi
 - 2911 | Prinsip-prinsip panduan untuk sebuah program reparasi di Timor-Leste
 - 2912 | **Kelayakan**
 - 2912 | **Akses**
 - 2912 | **Pemberdayaan**
 - 2912 | **Gender**
 - 2912 | **Pengutamaan berdasarkan kebutuhan**
 - 2913 | Program reparasi
 - 2913 | **Rehabilitasi**
 - 2913 | **Langkah-langkah kolektif**
 - 2913 | **Langkah-langkah simbolis**
 - 2914 | Tujuan-tujuan
 - 2914 | Kelompok-kelompok target
 - 2915 | **Boks: Definisi-definisi kerja untuk kelompok-kelompok target**

- 2916 | Pendanaan
- 2917 | Rentang waktu
- 2917 | Metode
 - 2917 | **Dukungan untuk ibu tak bersuami dan beasiswa untuk anak-anak mereka**
 - 2917 | **Dukungan untuk orang yang cacat, janda dan korban kekerasan seksual dan penyiksaan**
 - 2918 | **Dukungan untuk masyarakat yang sangat terkena dampak**
 - 2918 | **Menciptakan tanda-tanda peringatan**
 - 2918 | **Komitmen terhadap tidak muncul kembalinya kekerasan**
- 2919 | Badan pelaksana
- 2919 | Lembaga penerus CAVR

11. Rekomendasi

Dalam sebuah Timor-Leste yang merdeka, para anak-anak dan pemuda harus mewakili harapan kita di masa depan, dan perlindungan dan pemajuan hak-hak mereka harus selalu menjadi keutamaan. Pendidikan mereka harus didasarkan pada menanamkan cinta kasih dan penghormatan pada kehidupan, perdamaian, keadilan, dan kesetaraan sehingga sebuah dunia yang baru dapat dibangun di atas reruntuhan perang.

Magna Carta tentang Hak, Kewajiban, dan Jaminan bagi Rakyat Timor-Leste yang disahkan oleh Dewan Nasional Resistansi Timor (CNRT), Peniche, Portugal, 25 April 1998.

Untuk apa data kami diambil terus-menerus apabila tidak menghasilkan sesuatu?

Masyarakat Lalerek Mutin, Viqueque

Pendahuluan

Komisi diharuskan membuat “rekomendasi berkaitan perubahan hukum, politik, administratif, atau tindakan lain yang harus diambil untuk mencapai tujuan Komisi untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan menanggapi kebutuhan para korban pelanggaran hak asasi manusia” (Regulasi No. 10/2001, Pasal 21.2).

Ribuan kesaksian yang langsung diberikan oleh para korban dan saksi kepada Komisi telah memberikan gambaran yang jelas kepada bangsa ini dan komunitas internasional tentang penderitaan orang-orang Timor-Leste antara 1974 dan 1999. Penderitaan ini terutama diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran terhadap warga negara perorangan yang dilakukan agen-agen negara, terutama sesudah 1975.

Pelanggaran-pelanggaran itu dimungkinkan oleh iklim impunitas atau pembebasan dari hukuman (impunity) yang berlaku selama hampir keseluruhan periode ini, yang pada satu pihak disebabkan oleh ketiadaan check and balance yang demokratis terhadap militer Indonesia dalam sistem Indonesia dan, di lain pihak, disebabkan oleh toleransi masyarakat internasional kepada tindakan-tindakan berlebihan pemerintah Indonesia di dalam pelaksanaan urusan-urusannya.

Komisi telah diberi tugas untuk membuat rekomendasi-rekomendasi yang, apabila diterapkan, akan membantu mencegah terulangnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa lalu. Karena sebagian besar pelanggaran-pelanggaran hak-hak manusia yang tercantum dalam laporan ini dilakukan oleh negara, dan negara mempunyai tanggung jawab utama untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, pencegahan harus dipusatkan pada upaya menjamin bahwa tindakan-tindakan agen-agen negara tersebut tidak lagi dijauhkan dari kewajiban-kewajiban menurut hukum dan kehendak masyarakat umum. Para anggota militer, kepolisian, intelijen, peradilan, dan badan-badan pemerintah haruslah pada setiap saat selalu bertanggung jawab secara tegas kepada rakyat, hukum, dan standar-standar yang disetujui secara internasional. Pada gilirannya, masyarakat internasional tidak boleh hanya menyatakan standar-standar tersebut melainkan juga harus menuntut, melalui segala cara yang bisa ia gunakan, agar standar-standar ini dipenuhi terutama pada tahap di saat arsitektur negara baru ini sedang dikembangkan.

Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa bangsa-bangsa yang sedang memulihkan diri dari konflik berkepanjangan menghadapi tugas yang sulit untuk membangun institusi-institusi dan hukum demokratis yang dapat melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia. Sejumlah bangsa gagal menjawab tantangan ini dan kembali kepada kekerasan. Kita tidak dapat begitu saja menganggap bahwa hak-hak asasi manusia akan secara otomatis dilindungi di Timor-Leste. Kewaspadaan atas praktik-praktik yang menyebabkan terjadinya pelanggaran harus dilakukan secara terus-menerus.

Perlunya kewaspadaan ditunjukkan oleh kenyataan bahwa meskipun sebagian besar pelanggaran yang diteliti oleh Komisi dilakukan oleh para anggota angkatan bersenjata Indonesia, para pelaku ini adalah orang-orang Indonesia dan orang-orang Timor-Leste yang menjadi anggota tentara. Meskipun masa terburuk terjadi selama pendudukan militer, pelanggaran juga dilakukan oleh orang Timor-Leste terhadap saudara-saudara mereka sendiri selama perjuangan meraih kekuasaan pada masa konflik bersenjata internal 1975 dan di dalam tubuh gerakan Resistansi khususnya pada 1977. Usaha-usaha penjagaan atas sebuah negara demokratis harus dibentuk, diperkuat jika telah ada, serta diterapkan dan dihormati oleh semua institusi dan warga negara Timor-Leste.

Rekomendasi-rekomendasi ini telah dibuat dalam semangat membangun masa depan bagi anak-anak kita yang harus diberi jaminan bahwa kekerasan di masa lalu tidak akan terulang lagi. Kita harus belajar dari masa lalu supaya setiap anak Timor-Leste dapat mewujudkan potensi mereka.

Komisi menghargai para pemimpin nasional Timor-Leste, para wakil terpilih yang mengembangkan Konstitusi, para anggota Parlemen dan para pemimpin Gereja serta mereka yang berada di pemerintahan, masyarakat sipil (civil society), dan komunitas bisnis yang bekerja keras membangun bangsa berdasarkan prinsip-prinsip Konstitusi dan hak-hak asasi manusia internasional. Mereka termotivasi oleh nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang lahir dari masa lalu kita yang menyakitkan yang juga telah diekspresikan secara sangat kuat dalam Magna Carta hak-hak asasi manusia yang dirumuskan oleh Dewan Nasional Resistansi Rakyat Timor (CNRT) pada 1998, dan dalam kebijakan-kebijakan semua partai politik di Timor-Leste. Dalam pengakuan akan komitmen ini dan dari keyakinan yang mendalam yang didasarkan pada penyelidikan kami, Komisi membuat rekomendasi-rekomendasi ini dan mengakui bahwa ini adalah proses jangka panjang yang memerlukan komitmen dan tindakan yang berkelanjutan.

Rekomendasi-rekomendasi ini tersusun sebagai berikut:

- Timor-Leste dan masyarakat internasional
- Timor-Leste dan Portugal
- Hak asasi manusia di Timor-Leste: melindungi dan memajukan semua hak bagi setiap orang
- Hak asasi manusia di Timor-Leste: melindungi dan memajukan hak-hak mereka yang lemah
- Hak asasi manusia di Timor-Leste: melindungi dan memajukan hak-hak melalui lembaga yang efektif
- Hak asasi manusia di Timor-Leste: pelayanan keamanan yang melindungi dan memajukan hak asasi manusia
- Kebenaran dan keadilan
- Rekonsiliasi di masyarakat umum
- Rekonsiliasi dalam kalangan politik
- Rekonsiliasi dengan Indonesia
- Acolhimento (Penerimaan)
- Reparasi
- Institusi lanjutan

Rekomendasi-rekomendasi

1. Timor-Leste dan masyarakat internasional

Hubungan Timor-Leste dengan bangsa-bangsa lain tergambarkan oleh sifat-sifat dari konflik politik yang terjadi antara 1974 dan 1999. Konflik di Timor-Leste bukanlah semata-mata merupakan konflik internal tetapi lebih merupakan konflik yang ditandai dengan campurtangan pihak asing, invasi, dan pendudukan yang menyebabkan penderitaan dan kerugian yang besar bagi rakyat Timor-Leste dan sekaligus melanggar hukum internasional dan hak-hak asasi manusia yang seharusnya merupakan tugas masyarakat internasional untuk dilindungi dan ditegakkan. Sementara hubungan-hubungan ini telah membaik sejak campurtangan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1999, masih terdapat sejumlah langkah yang perlu diambil yang akan membantu pembangunan bangsa baru ini dan hubungan internasionalnya, serta untuk memastikan bahwa pengalaman Timor-Leste tidak terulang di situasi-situasi lain.

Komisi merekomendasikan agar:

- 1.1. Laporan Akhir Komisi disebarakan seluas-luasnya ke semua tingkatan masyarakat internasional melalui media, internet, dan jaringan-jaringan kerja lainnya dan terutama dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara serta institusi-institusi yang ditekankan dalam Laporan Akhir ini, termasuk Australia, Cina, Inggris, Prancis, Indonesia, Jepang, Portugal, Rusia, Amerika Serikat, Gereja Katolik, orang-orang Timor di luar Timor Leste, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil internasional.
- 1.2. Laporan Akhir ini disebarluaskan ke semua tingkatan Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP) dengan maksud memberikan gambaran yang lebih mendalam pada CPLP tentang Timor-Leste, anggota terbaru komunitas ini.
- 1.3. Laporan Akhir ini disebarluaskan ke semua tingkatan di tiap negara anggota Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN - Association of Southeast Asian Nations) dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang sejarah terkini Timor-Leste dan kepentingan-kepentingan Timor-Leste sebagai calon anggota baru badan regional yang penting ini.
- 1.4. Vatikan dan pemerintah Cina, Inggris, Prancis, Jepang, dan Rusia mengizinkan Timor-Leste menggunakan materi rahasia dan materi arsip mereka yang lain tentang periode 1974-1999 sehingga informasi ini dapat ditambahkan ke informasi yang sudah diberikan oleh negara-negara lain untuk memastikan bahwa Timor-Leste, setelah sekian tahun dalam isolasi, dapat membangun sebuah kumpulan informasi menyeluruh tentang sejarahnya.
- 1.5. Sekretaris Jenderal PBB meneruskan Laporan ini kepada Dewan Keamanan, Sidang Umum, Komite Khusus tentang Dekolonisasi dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan meminta tiap-tiap badan ini menentukan sesi khusus

untuk mendiskusikan dan merefleksikan laporan ini dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari isi dan temuan Laporan ini.

- 1.6. Negara-negara yang memiliki program kerja sama militer dengan Pemerintah Indonesia selama periode mandat Komisi, baik apakah bantuan ini digunakan secara langsung di Timor-Leste atau tidak, meminta maaf kepada rakyat Timor-Leste atas kegagalan menegakkan secara utuh hak-hak dan kebebasan mendasar yang telah disetujui secara internasional di Timor-Leste selama penjajahan Indonesia.
- 1.7. Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, terutama Amerika Serikat tapi juga Inggris dan Prancis yang memberikan dukungan militer terhadap Pemerintah Indonesia antara 1974 hingga 1999 dan yang memiliki tugas yang mengikat untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip terpenting dari tatanan dan perdamaian dunia dan untuk melindungi mereka yang lemah dan rentan, haruslah membantu Pemerintah Timor-Leste dalam pemberian reparasi kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia yang menderita selama pendudukan Indonesia.
- 1.8. Perusahaan-perusahaan bisnis yang memperoleh keuntungan dari penjualan senjata kepada Indonesia selama pendudukan Timor-Leste dan khususnya perusahaan yang produknya dipakai di Timor-Leste harus memberikan kontribusi kepada program reparasi kepada para korban pelanggaran hak-hak asasi manusia.
- 1.9. Semua negara anggota PBB hendaknya menolak memberikan visa bagi pejabat militer Indonesia manapun yang namanya tercantum dalam Laporan ini atau mereka yang memiliki tanggung jawab komando atas pasukan serta dituduh melakukan pelanggaran, dan mengambil langkah-langkah seperti membekukan rekening bank hingga yang bersangkutan telah secara independen dan meyakinkan dibuktikan tidak bersalah.
- 1.10. Negara-negara di dunia agar mengatur penjualan dan kerjasama militer dengan Indonesia secara lebih efektif dan memastikan dukungan itu benar-benar menjadi persyaratan dalam perkembangan menuju demokratisasi sepenuhnya, tunduknya militer terhadap aturan hukum dan pemerintah sipil, dan kepatuhan kuat kepada hak-hak asasi manusia internasional, termasuk penghargaan terhadap hak penentuan nasib sendiri.
- 1.11. Pemerintah Australia, Inggris, dan Selandia Baru mengambil upaya bersama untuk menegakkan kebenaran tentang kematian lima orang wartawan asing di Balibó pada 1975 sehingga fakta-fakta dan akuntabilitas akhirnya terbukti.
- 1.12. Gereja Katolik internasional, yang dipimpin oleh Vatikan, memberikan penghargaan yang layak pada Dom Martinho da Costa Lopes dan para suster, pastor, dan para kaum awam yang terbunuh pada 1999 yang berupaya melindungi orang-orang Timor-Leste.
- 1.13. Dokumen-dokumen dan bahan lainnya yang berhubungan dengan kejadian 1999 dan aktivitas milisi yang diduga telah dipindahkan ke Australia untuk

disimpan dengan aman setelah kedatangan Interfet pada 1999, harus dikembalikan ke Timor-Leste oleh Pemerintah Australia.

- 1.14. Pemerintah Timor-Leste, dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menghormati kontribusi masyarakat sipil (civil society) internasional untuk memajukan hak-hak asasi manusia di Timor-Leste, khususnya hak penentuan nasib sendiri, dan mengundang organisasi-organisasi masyarakat sipil (civil society) untuk menyumbangkan dokumentasi mereka tentang perjuangan ini kepada rakyat Timor-Leste sebagai sarana untuk mengenang dan memelihara hubungan dan solidaritas berkelanjutan.
- 1.15. Dukungan, secara praktis maupun finansial, hendaknya diberikan oleh institusi bisnis, badan kedermawanan, perusahaan, dan institusi akademik untuk membantu tokoh-tokoh kunci Timor-Leste dan tokoh lainnya mendokumentasikan sejarah dan pengalaman mereka agar dapat memperkaya literatur orang Timor yang terbatas jumlahnya untuk diwariskan pada generasi akan datang.

2. Timor-Leste dan Portugal

Komisi merekomendasikan agar Pemerintah Portugis:

- 1.1. Secara resmi mengakui telah menerima Laporan Akhir Komisi, menyerahkan kepada Parlemen Portugal, dan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan Portugal yang terkandung di dalam Laporan ini.
- 1.2. Mendukung penyebaran Laporan ini dan produk-produk yang berhubungan secara finansial maupun logistik melalui sektor-sektor masyarakat Portugis yang berkaitan dan di dalam Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis (CPLP).
- 1.3. Membantu pemerintah Timor-Leste dalam pemberian reparasi untuk para korban pelanggaran hak-hak asasi manusia akibat konflik-konflik di Timor-Leste.
- 1.4. Menyediakan salinan materi-materi arsip resmi yang berhubungan dengan Timor-Leste bagi rakyat Timor-Leste sebagai bagian penting dari warisan nasional dan membantu organisasi-organisasi masyarakat sipil Portugis, media, dan Gereja Portugis untuk menyediakan materi-materi yang mereka miliki kepada Timor-Leste.
- 1.5. Melaksanakan sebuah audit terhadap artifak-artifak (benda-benda bersejarah) dan kekayaan budaya lainnya yang berasal dari orang Timor yang saat ini berada di Portugal, dengan maksud untuk mengembalikan ke Timor-Leste agar dapat membantu pemeliharaan, pengembangan, dan penyebaran kebudayaan Timor-Leste sesuai dengan hak penentuan nasib kebudayaan sendiri dan prinsip-prinsip Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- 1.6. Memajukan hubungan dua-arah dengan Indonesia, dengan mempertimbangkan kaitan sejarah Portugal yang panjang dengan wilayah ini dan situasi yang telah

berubah di Timor-Leste, agar dapat memperdalam saling pengertian dan kerjasama, khususnya pada tingkatan hubungan antara rakyat kedua bangsa, dan agar bersama-sama berkontribusi bagi Timor-Leste.

3. Hak asasi manusia Timor-Leste: memajukan dan melindungi semua hak bagi setiap orang

Kekerasan perang di Timor-Leste tidak saja berdampak pada para petempur saja tetapi juga mengakibatkan pelanggaran hak asasi para warga sipil. Hak dan kebebasan sipil dan politik dilanggar selama konflik, termasuk hak untuk hidup itu sendiri dan hak keamanan pribadi, hak partisipasi, dan hak atas kebebasan-kebebasan mendasar manusia yang sangat penting untuk martabat dan pengembangan manusia. Periode konflik yang panjang juga berdampak terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan dari rakyat Timor-Leste termasuk mengenai standar kehidupan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan pendidikan.

Melalui pembuatan Magna Carta CNRT dan Konstitusi bangsa ini serta ratifikasi terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan, Timor-Leste telah mendemonstrasikan komitmennya untuk melepaskan diri dari masa lalu dan untuk memajukan serta melindungi semua hak untuk semua orang.

Komisi merekomendasikan agar:

- 3.1.1. Pemerintah Timor-Leste mengadopsi pendekatan berdasarkan hak asasi manusia dalam pemerintahan, pembuatan kebijakan, dan pembangunan agar semua keputusan pada keseluruhan sistem pemerintahan diterangi oleh prinsip-prinsip hak asasi.
- 3.1.2. Pemerintah mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin pelaksanaan hak-hak yang telah ia tekadkan untuk dilaksanakan melalui ratifikasi terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan traktat-traktat lainnya.
- 3.3.3. Pemerintah menggunakan pelaporan traktat hak asasi manusianya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai alat untuk mengevaluasi kemajuannya dalam pelaksanaan semua hak asasi manusia untuk semua dan laporan-laporan ini disediakan secara luas bagi diskusi publik di Timor-Leste.

3.2. Hak untuk hidup, untuk bebas dari kelaparan, dan hak atas standar hidup yang memadai

Sejumlah besar orang Timor-Leste terbunuh atau meninggal selama periode mandat karena penyebab-penyebab yang berhubungan dengan konflik, termasuk pembantaian. Kebanyakan kematian tersebut akibat kelaparan yang sebenarnya bisa dicegah selama tahun-tahun awal pendudukan militer Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap “hak-hak mendasar bagi setiap orang untuk bebas dari kelaparan” (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Pasal 11.2).

Komisi merekomendasikan agar:

- 3.2.1. Pihak keluarga korban dibantu untuk menemukan dan menguburkan kembali jasad sanak-saudara dan orang-orang yang disayangi yang tewas selama konflik dan agar, bilamana sumberdaya memungkinkan, dilakukan penggalian kembali menurut standar-standar yang memadai, untuk memungkinkan identifikasi dan penetapan penyebab kematian.
- 3.2.2. Atas konsultasi dengan keluarga korban dan komunitas, situs-situs yang berhubungan dengan pembunuhan dan kematian dijadikan tempat peringatan sebagai penghormatan pada korban.
- 3.2.3. Dibentuk suatu catatan publik berisikan daftar orang-orang yang hilang dan, bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, dilaksanakan suatu penyelidikan sistematis untuk mencairitahu dan menetapkan keberadaan serta nasib mereka yang namanya tercantum dalam daftar tersebut.
- 3.2.4. Parlemen menetapkan suatu hari dalam setahun sebagai peringatan nasional tahunan atas kelaparan 1978-1979 untuk memperingati mereka yang tewas karena kelaparan dan karena sebab-sebab yang berkaitan pada saat itu dan untuk menggalakkan diskusi, penelitian dan kegiatan pendidikan tentang masalah ketahanan pangan dewasa ini di Timor-Leste, termasuk kesiapan bencana yang efektif.
- 3.2.5. Dalam kasus bencana kemanusiaan yang menyebabkan rakyat meninggalkan rumah, Pemerintah bertindak menurut Prinsip-prinsip Penuntun PBB tentang Pengungsian Internal (UN Guiding Principles on Internal Displacement) (E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 February 1998).
- 3.2.6. Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang menjamin bahwa hasil-hasil pembangunan dinikmati secara merata, menyentuh komunitas-komunitas yang paling terisolasi, memberi keuntungan kepada dan melibatkan laki-laki dan perempuan, anak-anak, kaum tua dan cacat, dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada mereka yang paling dirugikan.

3.3. Hak keamanan pribadi

Hak atas keamanan pribadi ditegakkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tetapi selama hampir keseluruhan periode 1974-1999 rakyat Timor-Leste mengalami ketidakamanan secara pribadi dalam berbagai bentuk yang berlangsung terus-menerus. Ketidakamanan ini antara lain berupa penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, interogasi, pengganggauan kebebasan/keleluasaan pribadi, dan pengadilan yang tidak adil.

Komisi merekomendasikan agar:

- 3.3.1. Gedung-gedung yang terdapat di seluruh pelosok Timor-Leste yang merupakan tempat yang biasa digunakan untuk penahanan didaftarkan dalam sebuah register nasional, bersama dengan informasi tentang mereka

yang pernah ditahan dan kondisi penahanan di tempat-tempat tersebut, dan pada tempat-tempat terpilih tertentu dibuatkan peringatan berupa papan nama-nama atau cara peringatan lain yang memadai.

- 3.3.2. Bagi orang-orang yang masih terus menderita secara fisik maupun mental akibat penyiksaan atau bentuk perlakuan lain yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat atau akibat penghukuman yang dialami selama konflik, kondisi mereka harus didiagnosa secara profesional serta dibantu dengan konseling dan bentuk rehabilitasi lainnya.
- 3.3.3. Badan-badan penegakan hukum tunduk kepada standar-standar tertinggi proses pembelaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penangkapan, investigasi setelah penangkapan, akses ke penasihat hukum, dan penahanan dalam penjara, sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum dalam negeri dan standar-standar hak asasi manusia.
- 3.3.4. Pemerintah pada setiap saat menjalankan kebijakan akses terbuka bagi pengawasan dari luar atas semua penjara di Timor-Leste, oleh institusi-institusi negara, masyarakat sipil Timor-Leste, dan organisasi-organisasi internasional.
- 3.3.5. Pemerintah memastikan penetapan dan pemeliharaan prosedur yang memadai untuk menjamin bahwa para narapidana ditahan dalam kondisi yang menghormati martabat mereka sebagai manusia, termasuk:
 - Akses ke perawatan medis sepenuhnya bagi semua orang yang ditahan.
 - Makanan dan minuman yang memadai bagi semua orang yang ditahan.
 - Prosedur-prosedur yang sepatutnya bagi penahanan narapidana anak-anak dan remaja, termasuk ditahan secara terpisah dari narapidana dewasa.
 - Prosedur yang sepatutnya bagi penahanan narapidana perempuan dan laki-laki dengan fasilitas-fasilitas yang terpisah.
 - Penyediaan sarana beribadah.
 - Penyusunan program rehabilitasi narapidana, yang bertujuan membantu mereka mempersiapkan diri kembali ke kehidupan sosial dan ekonomi sehari-hari, dan menjadi anggota utuh dan aktif dari komunitas. Program-program tersebut harus dibiayai secara memadai.
 - Aturan dan prosedur yang ketat yang mencegah dilakukannya penyiksaan atau penganiayaan seksual dalam bentuk apapun terhadap mereka yang ditahan.
 - Prosedur-prosedur yang ketat bagi penggunaan kamar isolasi. Penggunaan kamar isolasi hanya boleh dilakukan secara sementara dan pada kasus-kasus khusus atas dasar perintah pengadilan yang mengizinkan hal tersebut. Prosedur kesehatan fisik dan mental harus dibuat dan diterapkan kepada mereka yang ditahan di kamar isolasi.

- Pembangunan dan penerapan pelatihan hak-hak manusia yang berkelanjutan bagi semua petugas penjara, termasuk petugas yang berpangkat tinggi.

3.4. Hak atas keamanan pribadi: sebuah komitmen nasional melawan kekerasan

Selama sebagian besar masa konflik, rakyat Timor-Leste mengalami kekerasan yang meluas. Konflik antara partai-partai politik utama pada 1975 mengakibatkan meletusnya kekerasan fisik yang singkat di banyak tempat, kemudian Indonesia menggunakan kekuatan militer dan pasukannya untuk memaksakan kehendaknya terhadap rakyat Timor-Leste dan mempertahankan kehadirannya yang memakan banyak korban selama 24 tahun konflik. Penggunaan kekuasaan secara efektif memerlukan kerjasama. Namun, dalam budaya yang penuh kekerasan dan ketakutan, kekuatan lebih cenderung digunakan sebagai cara menyelesaikan masalah dan mempertahankan kontrol. Mereka yang berkuasa dapat mengambil sikap yang arogan dan meremehkan orang lain. Sekali tertanam, budaya kekerasan menjadi sesuatu yang normal dan merusak hubungan antarmanusia pada setiap tingkatan, dan dalam berbagai macam hubungan, termasuk hubungan antara pejabat dan warga negara, laki-laki dan perempuan, majikan dan pegawai, guru dan murid, orangtua dan anak-anak mereka. Di sisi lain, Resistansi Timor-Leste, Gereja, dan masyarakat sipil internasional dihargai dan didukung berkat penggunaan dialog dan strategi damai yang kreatif dalam memperjuangkan tujuan-tujuan mereka menuntut penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan.

Komisi merekomendasikan agar:

- 3.4.1. Rakyat Timor-Leste berupaya berefleksi tentang baik pengalaman negatif mereka berkaitan dengan kekerasan—asal usulnya, bagaimana kekerasan digunakan, dan apa dampaknya—maupun pengalaman positif mereka tentang dialog dan cara-cara damai lainnya yang digunakan untuk mencapai tujuan politik mereka, dan bagaimana pelajaran penting dari pengalaman ini dapat digunakan untuk memajukan budaya saling menghormati, keadilan, dan penyelesaian konflik secara damai di segala aspek kehidupan di Timor-Leste.
- 3.4.2. Partai-partai politik melanjutkan praktik mereka untuk secara sungguh-sungguh meninggalkan penggunaan kekerasan dalam proses politik dan mengancam keras siapapun di antara mereka yang menyokong digunakannya kekerasan, membahayakan kenetralan profesional dari tentara dan polisi, atau yang mendukung kelompok-kelompok yang berhubungan dengan kekerasan dalam cara apapun.
- 3.4.3. Parlemen dan pemerintah mengadakan penyelidikan menyangkut sengketa tanah yang muncul sebagai akibat dari program pemindahan paksa penduduk yang dilakukan secara luas selama konflik politik, dengan maksud untuk melakukan penengahan secara damai terhadap sengketa-sengketa tersebut dan menghindari kekerasan.

- 3.4.4. Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi pencegahan kekerasan domestik perlu dilanjutkan dan diperdalam, terutama di tingkat distrik.
- 3.4.5. Timor-Leste menggunakan keanggotaannya dalam forum regional dan internasional untuk menjadi penentang yang giat terhadap setiap agresi militer dan menjadi pembela gigih atas prinsip-prinsip internasional, sistem PBB, dan dialog dan diplomasi dalam menangani konflik.
- 3.4.6. Sistem pendidikan di Timor-Leste, baik sistem pemerintah maupun swasta, memajukan nilai-nilai dalam pendidikan dan mengembangkan kursus dan metode-metode pengajaran yang menanamkan pada murid keterampilan dan budaya damai, saling menghormati dan anti-kekerasan, termasuk memperkenalkan tentang tokoh dari Timor atau negara lain yang mencapai tujuannya, baik besar ataupun kecil, secara damai.
- 3.4.7. Kekuatan dari olahraga, musik, drama, dan seni lainnya di Timor-Leste dapat digunakan untuk mempromosikan perdamaian, anti-kekerasan, dan pembangunan nilai dan hubungan masyarakat yang positif, terutama di antara kawula muda.

3.5. Hak untuk berpartisipasi – menjamin hak-hak dasar

Kebebasan-kebebasan yang merupakan prasyarat untuk menggunakan hak berpartisipasi tertindas baik oleh sistem kolonialisme Portugis maupun oleh rezim pendudukan Indonesia. Mereka yang menggunakan haknya atas kebebasan mendapatkan informasi, berpendapat, bergerak, berserikat, dan berkumpul selama konflik dengan Indonesia mengambil risiko yang tinggi dan terpaksa beroperasi secara klandestin, dan sering sangat menderita karena menggunakan hak-hak tersebut. Sistem pemerintahan di bawah Indonesia ditandai oleh kerahasiaan dan kontrol yang sangat ketat. Sifat pemerintahan ini menyebabkan terbunuhnya wartawan asing dan, antara lain, pembantaian para demonstran di pemakaman Santa Cruz pada 12 November 1991. Hanya informasi, media, partai politik, dan perkumpulan-perkumpulan yang dapat diterima oleh militer Indonesia yang ditoleransi dan kebebasan bergerak dalam wilayah Timor-Leste dan di luarnya diawasi dan dibatasi. Orang Timor-Leste diperlakukan sebagai sasaran, bukan sebagai warga negara. Sebagai akibatnya, pemerintah tidak bertanggung jawab pada rakyatnya, pembangunan gagal, dan pelanggaran HAM dilakukan tanpa penghukuman.

Komisi merekomendasikan agar:

- 3.5.1. Pemerintah Timor-Leste melanjutkan kebijakan 'pemerintah terbuka'-nya dalam berurusan dengan masyarakat dan, demi mendorong partisipasi dan pertanggungjawaban, berupaya memaksimalkan komunikasi dua-arah dengan masyarakat, termasuk melalui wakil-wakilnya yang duduk di Parlemen, organisasi masyarakat sipil, dan media.
- 3.5.2. Parlemen memberlakukan undang-undang tentang arsip nasional untuk memastikan bahwa semua berkas resmi di seluruh pelosok Timor-

Leste dilestarikan dengan baik dan diatur berdasarkan sistem standar nasional dan bahwa, demi meningkatkan partisipasi publik dan tingkat pertanggungjawaban para pelayan publik, peraturan yang mengatur akses terhadap informasi tidak secara berlebihan membatasi informasi yang dapat diungkapkan kepada publik dan mengikutsertakan dalam peraturan tersebut ketentuan-ketentuan tentang Kebebasan Informasi.

- 3.5.3. Para penerbit, jurnalis, dan tiap-tiap bagian dari media massa memahami peran penting mereka dalam memupuk kewarganegaraan yang efektif di Timor-Leste, dan bahwa kewajiban profesional terpenting mereka adalah menyediakan berita yang independen dan akurat, informasi, dan sudut pandang alternatif tentang isu-isu publik penting kepada setiap bagian dalam masyarakat Timor-Leste.
- 3.5.4. Media memprakarsai sebuah penghargaan yang diberikan setiap tahun untuk jurnalisisme investigatif yang dibuat oleh jurnalis Timor-Leste dan bahwa penghargaan ini diberikan untuk memperingati para jurnalis yang kehilangan nyawa mereka di Timor-Leste dalam upaya menggali kebenaran selama periode 1974-1999.
- 3.5.5. Kepentingan mendasar hak akan kebebasan bergerak, berpendapat, berserikat, dan berkumpul bagi daya hidup dan kreativitas kehidupan politik, budaya, sosial, dan ekonomi di Timor-Leste perlu terus-menerus diakui dan dijunjung tinggi dan, khususnya, instansi penegak hukum terus-menerus mendapatkan pelatihan tentang hak-hak tersebut dan tentang prosedur yang harus ditaati secara ketat dalam penanganan demonstrasi publik secara damai.
- 3.5.6. Undang-undang tentang fitnah tidak menjadi bagian dari hukum pidana, sehingga hal-hal demikian dapat diatur dalam pengadilan hukum sipil.

3.6. Hak untuk berpartisipasi – kewarganegaraan

Setelah selama beberapa generasi dipinggirkan, akhirnya warganegara perorangan menjadi pusat dari bangsa demokratik baru Timor-Leste—sebagai ahli waris sekaligus pelaku dalam kehidupan negara. Perubahan ini berasal sebagian besar dari semangat inklusif yang dikembangkan dalam gerakan Resistansi, dan yang juga telah memberikan sumbangan yang berarti pada keberhasilan gerakan Resistansi itu sendiri. Kesempatan untuk turut serta memberikan sumbangan tetap merupakan sesuatu yang penting bagi masa depan—baik sebagai hak maupun sebagai kewajiban yang diilhami oleh semangat berinisiatif, berkegiatan, berdikari, dan berkorban yang telah membantu Timor-Leste di masa lalu. Komisi terus-menerus mengingatkan bahwa ‘rakyat kecil’ ingin dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan bangsa baru ini, lepas dari sejauh apapun jarak mereka, terutama mereka yang hidup di daerah perdesaan, jauh dari mekanisme dan proses pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Kewarganegaraan melambangkan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa. Kewarganegaraan ini didasarkan pada rasa memiliki negara ini, kebanggaan nasional, dan komitmen kepada rakyat kita, nilai-nilai kita, dan masa depan kita bersama. Adalah sangat penting memelihara semangat kewarganegaraan ini melalui pendidikan publik yang berkelanjutan tentang pentingnya kewarganegaraan ini dan apa artinya dalam praktik.

Komisi merekomendasikan agar:

- 3.6.1. Diterapkan sebuah program pendidikan kewarganegaraan yang memusatkan diri pada struktur, kelembagaan, dan proses demokrasi serta hak dan kewajiban warganegara; program ini sebaiknya diajarkan di sekolah-sekolah.
- 3.6.2. Semua pelayan publik, termasuk polisi, militer, guru, dan pegawai di setiap instansi pemerintah terus-menerus menerima pelatihan, pelatihan jabatan, dan evaluasi pelaksanaan tugas secara teratur berkaitan dengan peran mereka sebagai pelayan pemerintah dan warganegara Timor-Leste, untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas dalam cara yang etis, profesional, dan tidak berpihak secara politik.
- 3.6.3. Hari Warganegara ditetapkan dan dirayakan di Timor-Leste untuk meningkatkan kesadaran tentang makna dan pentingnya kewarganegaraan dan memajukan dan merayakan nilai-nilai dan tanggung jawab demokratik kita.
- 3.6.4. Diadakannya pemberian penghargaan tahunan bagi para warganegara Timor-Leste yang memberikan sumbangan yang berarti pada masyarakat sekitarnya atau pada bangsa ini dan diakui sebagai model prakarsa dan kewarganegaraan yang baik bagi yang lain, terutama kawula muda.

3.7. Hak atas pendidikan dan hak penentuan budaya sendiri

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pasal 15) mengakui hak tiap orang atas kehidupan budaya dan kebutuhan yang berkaitan dengan itu untuk melestarikan, mengembangkan, dan menyebarkan budaya termasuk melalui sistem pendidikan formal. Meski sebagian dari tradisi dan budaya unik Timor-Leste mampu bertahan hingga saat ini, di bawah sistem kolonial Portugal dan Indonesia hak ini tidak dihargai sepenuhnya. Sistem Portugis terutama mengabaikan pendidikan bagi rakyat. Indonesia, meskipun menanggulangi butahuruf dan menyediakan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan, menggunakannya sebagai alat untuk mempromosikan integrasi, bukan memajukan penentuan budaya sendiri.

Komisi menyatakan penghargaannya bagi Pemerintah atas komitmennya terhadap pendidikan universal dan merekomendasikan agar:

- 3.7.1. Dapat dikembangkan lebih lanjut berbagai cara memanfaatkan budaya serta tradisi Timor-Leste sebagai sumber identitas nasional dan pembangunan kebangsaan, termasuk juga melalui sistem pendidikan, dan penelitian untuk menopang tujuan ini perlu dilakukan oleh perguruan tinggi dan instansi-instansi lainnya yang relevan.

- 3.7.2. Lembaga-lembaga pendidikan milik Pemerintah serta milik Gereja bekerjasama untuk mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai dan bertujuan mengembangkan nilai-nilai utama yang sesuai dengan tradisi dan situasi terkini Timor-Leste dan yang akan memajukan budaya perdamaian, anti-kekerasan, dan hak asasi manusia.
- 3.7.3. Lembaga-lembaga pendidikan milik Pemerintah serta milik Gereja bekerjasama untuk mengembangkan kurikulum dan metodologi pengajaran tentang hak asasi manusia untuk digunakan pada tiap jenjang pendidikan dan menggunakan Laporan ini dan bahan-bahan lainnya untuk memastikan bahwa materi yang dikembangkan berdasarkan pada pengalaman Timor-Leste yang sesungguhnya.
- 3.7.4. Dengan mengingat upaya-upaya kreatif penanggulangan butahuruf yang dilakukan pada 1974-75, Pemerintah perlu mengembangkan program-program khusus yang bertujuan menghapus butahuruf di Timor-Leste, terutama bagi orang dewasa, termasuk perempuan, di tempat-tempat terpencil.
- 3.7.5. Departemen Pendidikan, guru, dan dosen menggunakan bahan-bahan multimedia yang telah dibuat dan dikumpulkan oleh Komisi, selama program kerjanya menyangkut rekonsiliasi dan penelitian Komisi tentang periode 1974-1999, sebagai cara untuk memperkaya kandungan studi tentang Timor-Leste dalam kurikulum pendidikan dan membantu mengajarkan sejarah, ilmu politik, resolusi konflik, hubungan internasional, dan hukum.
- 3.7.6. Pemerintah menetapkan sebuah program pengembalian benda bersejarah, dokumen, dan bahan-bahan berkaitan kebudayaan Timor-Leste yang pada saat ini berada di luar negeri dan mengundang semua pemerintah, lembaga, dan perorangan yang memiliki benda atau dokumen semacam itu untuk mengembalikannya pada Timor-Leste untuk membantu melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan budaya Timor-Leste sesuai dengan pasal 15 dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- 3.7.7. Pemerintah menetapkan sebuah program untuk memugar dan melestarikan tempat atau benda yang memiliki nilai budaya penting yang rusak atau dihancurkan selama konflik, seperti misalnya Palácio das Cinzas di Dili untuk mengingatkan generasi mendatang tentang penghancuran 1999 dan tantangan di masa depan yang harus dihadapi oleh para pemimpin Timor-Leste dalam mendirikan sebuah negara baru.

3.8. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan

Lingkungan hidup yang sehat memungkinkan seorang individu menikmati hak-hak mendasarnya seperti hak kesehatan, hak atas makanan yang memadai, hak atas perumahan dan penghasilan. Perusakan lingkungan hidup bukan saja merupakan tindakan kejahatan terhadap alam, tapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Timor-Leste mengalami kerusakan lingkungan berupa berkurangnya

flora, fauna, dan kualitas tanah. Ini disebabkan banyak faktor tapi termasuk di antaranya eksploitasi sumberdaya alam oleh penguasa kolonial, kerusakan akibat perang, tidak terpeliharanya tanah karena konflik yang berkepanjangan, terkonsumsinya tanaman dan binatang endemik saat penduduk dalam pelarian, dan dipindahkannya spesimen flora dan fauna dari Timor-Leste ke Indonesia sebagai tandamata perang.

Komisi merekomendasikan agar:

- 3.8.1. Program Lingkungan Hidup PBB (United Nations Environment Programme, UNEP) yang banyak berpengalaman dalam regenerasi lingkungan hidup pasca-konflik, diundang untuk mengadakan studi tentang situasi lingkungan di Timor-Leste, dengan turut mempertimbangkan proyek-proyek luarbiasa yang telah berjalan dalam bidang ini, dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan perbaikan yang dapat dilakukan guna membantu Timor-Leste mencapai salah satu Sasaran Pembangunan Millenium PBB (UN Millenium Development Goal) tentang lingkungan hidup berkelanjutan.
- 3.8.2. Diadakannya penelitian di daerah-daerah di mana diperkirakan zat penggundul hutan (defoliant) digunakan untuk kepentingan militer, untuk memastikan bahwa daerah-daerah tersebut aman bagi masyarakat setempat, dan jika perlu, rehabilitasi daerah-daerah tersebut dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkena dampak dan dengan dukungan dari pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang terlibat memasok peralatan militer bagi militer Indonesia.
- 3.8.3. Obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan dan obat-obat alternatif lain yang digunakan di hutan selama perjuangan, didokumentasi dan dievaluasi tingkat efektivitasnya, dengan maksud untuk dapat digunakan di masa depan.
- 3.8.4. Diadakan sebuah program pendidikan publik jangka panjang, termasuk lewat sistem pendidikan formal, untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang kaitan antara lingkungan fisik yang bersih dengan kesehatan, terutama bagi anak-anak.
- 3.8.5. Hari Kesehatan Dunia yang tiap tahun dirayakan pada 7 April dijadikan sebagai saat memfokuskan perhatian pada tema-tema tersebut di atas.

4. Hak asasi manusia di rumah: memajukan dan melindungi hak mereka yang rentan

4.1. Perempuan

Selama konflik, perempuan memainkan peran penting dalam masyarakat Timor-Leste—baik di Timor-Leste maupun dalam komunitas diaspora—sebagai tumpuan bagi keluarga dan masyarakat, kadang ditinggalkan seorang diri tanpa suami, ayah, atau kerabat laki-laki yang dapat mendukung mereka. Peran penting mereka juga sebagai pembela hak asasi manusia. Di Timor-Leste, konflik menimbulkan kondisi

yang membatasi kebebasan perempuan dan anak perempuan yang juga sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk dalam pelanggaran ini antara lain pemerkosaan, perbudakan seksual, dan jenis-jenis kekerasan seksual lainnya, yang meski kebanyakan dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, juga dilakukan oleh laki-laki Timor-Leste. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sering diasingkan oleh masyarakat sekitar mereka dan hal ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan lain lagi. Hingga kini, beberapa perempuan masih terus menanggung beban dari pengalamannya.

Melalui interaksi dengan para korban dan masing-masing keluarga korban, Komisi menilai bahwa kekerasan domestik adalah sesuatu yang tidak jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari banyak korban. Misalnya, beberapa dari laki-laki yang pernah ditahan dan disiksa mengaku pada Komisi bahwa akibat perlakuan ini, kekerasan sudah menjadi pola berperilaku bagi mereka.

Di Timor-Leste saat ini, kejadian-kejadian kekerasan domestik dan penganiayaan seksual masih tinggi. Sebuah komitmen nasional untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan yang terjadi di ruang publik maupun yang terjadi di ruang pribadi, perlu sekali dilaksanakan untuk menghentikan siklus kekerasan dan ketakutan yang mewarnai kehidupan banyak perempuan dan anak-anak perempuan. Program aksi ini harus juga memperkuat pengembangan budaya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, karena diskriminasi terhadap perempuan adalah faktor utama yang menunjang terjadinya kekerasan terhadap mereka.

Komisi merekomendasikan agar:

- 4.1.1. Beragam sumbangan yang diberikan oleh perempuan yang terlibat dalam gerakan Resistansi—baik di dalam Timor-Leste maupun dalam komunitas diaspora—diakui lebih penuh, dan dikembangkan cara-cara dokumentasi dan penyebaran informasi tentang peranan yang dimainkan oleh perempuan, termasuk mengajarkan materi ini di sekolah-sekolah.
- 4.1.2. Seruan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Tim-Tim (KPP-HAM) agar Pemerintah Indonesia memberikan rehabilitasi, kompensasi, dan dukungan bagi para korban dari kejadian 1999 di Timor-Leste, termasuk bagi perempuan dan keluarga, agar diterapkan.
- 4.1.3. Kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan di Timor-Leste di mana terdapat unsur kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan harus dikeluarkan dari segala kemungkinan pemberian amnesti, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (Par. 11, S/Res/1325 2000).
- 4.1.4. Prasangka berkelanjutan terhadap para perempuan korban pelanggaran seksual perlu diberantas sesegara mungkin oleh Pemerintah, lembaga keagamaan, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat sipil, demi menegakkan martabat mereka yang telah menderita sebagai korban.

- 4.1.5. Pemerintah, bersama dengan organisasi keagamaan dan masyarakat sipil melanjutkan upayanya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bahwa langkah-langkah yang perlu diambil meliputi (a) segera disahkannya undang-undang tentang kekerasan domestik, termasuk langkah-langkah memberikan pertolongan pertama untuk melindungi para korban pada saat-saat kritis; (b) disediakannya lebih banyak sumberdaya dan pelatihan bagi alat-alat penegak hukum, kelompok-kelompok yang berhubungan dengan pengadilan dan lembaga bantuan hukum, untuk memungkinkan mereka memberikan tanggapan yang efektif dalam kasus-kasus kekerasan domestik; (c) dukungan berkelanjutan bagi instansi dan organisasi masyarakat sipil yang dalam kegiatannya memberikan layanan dan dukungan yang berkualitas bagi para korban, dan juga bagi mereka yang bekerjasama dengan laki-laki untuk mengubah pola perilaku yang mengandung kekerasan.
- 4.1.6. 16 Hari Aktivisme melawan Kekerasan terhadap Perempuan setiap tahun dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama di distrik-distrik.
- 4.1.7. Angkatan Bersenjata dan Kepolisian mengembangkan kebijakan yang dapat ditegakkan secara kuat yang bertujuan memajukan kesetaraan gender, melarang eksploitasi seksual dan kekerasan terhadap perempuan, dan mengenakan sanksi yang sekeras-kerasnya terhadap anggota aparat keamanan yang bersalah melanggar kebijakan tersebut, agar perempuan Timor-Leste tidak lagi menyimpan rasa takut lagi pada mereka yang dipercaya melindungi dan menegakkan hak-hak mereka.
- 4.1.8. Harmonisasi antara undang-undang Timor-Leste dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) dilanjutkan, dan disediakan sumberdaya yang memadai bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penerapan CEDAW dan melaporkan pada PBB tentang ketaatan Timor-Leste pada CEDAW, serta dikembangkan pemahaman tentang CEDAW di kalangan masyarakat, terutama melalui sistem pendidikan, media, dan Gereja.
- 4.1.9. Akses terhadap informasi dan layanan menyangkut kesehatan reproduktif, keluarga berencana, dan cara-cara mengasuh anak disediakan secara luas bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk melalui sekolah, supaya keputusan tentang masalah reproduksi diambil secara sadar dan tanggung jawab reproduksi serta pengasuhan anak dibagikan merata antara laki-laki dan perempuan dan bebas dari unsur paksaan atau kekerasan.
- 4.1.10. Langkah-langkah tertentu perlu diambil guna mengakui dan mendukung peranan perempuan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik dan dalam membangun perdamaian, termasuk pada tingkat lokal.

4.1.11. Pemerintah agar meningkatkan status Kantor Promosi Kesetaraan menjadi Sekretaris Negara di dalam kabinet Perdana Menteri dan atau menyediakan Dewan Penasihat bagi Kantor Promosi Kesetaraan sebagai cara untuk memajukan lebih jauh dan mengutamakan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan sepenuhnya dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik Timor-Leste, termasuk melalui pemajuan tingkat melek huruf di antara perempuan di pedesaan dan meningkatkan partisipasi anak perempuan dan perempuan dewasa dalam pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi.

4.2. Anak dan pemuda

Hak-hak anak dilanggar selama tahun-tahun konflik. Anak melihat atau mengalami peristiwa traumatis, meninggal karena kelaparan, terpindahkan dari tempat tinggal mereka, kehilangan orangtua, terpisah dari orangtua, dan tidak mendapatkan kesempatan yang layak mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya. Anak-anak juga diikutsertakan dalam pertempuran, baik dalam konflik bersenjata internal pada 1975 dan selama pendudukan Indonesia ketika mereka digunakan oleh militer Indonesia untuk memberikan dukungan logistik dan dukungan lainnya. Ada juga anak yang dirampas dari orangtuanya oleh militer dan pejabat Indonesia, dan sering dibawa ke tempat-tempat yang jauh di Indonesia, dan masih tetap terpisah dari keluarga mereka. Komisi mendengarkan, dengan rasa duka yang mendalam, anak-anak Timor-Leste di Timor Barat yang merasakan bahwa mereka adalah bagian dari Timor-Leste tetapi sekaligus terasing dari Timor-Leste.

Demi menjamin masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Timor-Leste, Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Dengan melakukan hal itu, Pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi dan menjamin hak anak dan bersedia bertanggung jawab atas komitmen tersebut di hadapan masyarakat internasional. Menjamin sebuah masa depan bagi para kawula muda kita adalah salah satu tantangan utama Timor-Leste.

Komisi merekomendasikan agar:

- 4.2.1. Proses harmonisasi undang-undang Timor-Leste dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC) diteruskan, dan disediakan sumberdaya yang memadai bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penerapan CRC dan pelaporan pada PBB tentang ketaatan Timor-Leste pada CRC, dan dikembangkan pemahaman tentang CRC di kalangan masyarakat, terutama melalui sistem pendidikan, media, dan Gereja.
- 4.2.2. Diadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mirip dengan kampanye dalam bidang kekerasan domestik, untuk mendidik orangtua, guru, dan masyarakat tentang efek kekerasan fisik dan emosional terhadap anak dan menyarankan bentuk-bentuk alternatif yang dapat digunakan dalam mengontrol perilaku anak dan membentuk watak mereka.
- 4.2.3. Contoh-contoh peran yang positif bagi anak perempuan dan pemuda dan bagi anak laki-laki dan pemuda diidentifikasi dan dimajukan.

- 4.2.4. Disediakan sumberdaya yang layak bagi pengembangan prasarana olahraga dan pengelolaan olahraga agar potensi olahraga dapat direalisasikan dalam menguatkan hubungan masyarakat dan diwujudkan pengembangan menyeluruh kawula muda, termasuk pemberian akses yang setara bagi anak perempuan dan pemuda.
- 4.2.5. Program pendidikan kesehatan reproduksi yang akurat, berimbang, dan lengkap dan yang membina rasa tanggung jawab diberikan kepada kawula muda Timor-Leste sejalan dengan Pasal 17 CRC yang menekankan hak atas informasi terutama apabila informasi tersebut memajukan kesejahteraan sosial, spiritual, dan moral serta kesehatan jasmani dan mental.
- 4.2.6. Diambil langkah-langkah untuk memastikan agar kebijakan Pemerintah tentang pendidikan semesta diperluas dalam praktiknya mencakup anak-anak, terutama anak yatim/piatu, anak cacat, dan yang bermukim di desa-desa terpencil untuk menjamin agar semua anak perempuan mempunyai akses penuh dan setara terhadap pendidikan, dan disediakan peluang yang lebih luas untuk pelatihan kejuruan.
- 4.2.7. Anak-anak Timor-Leste yang dibawa ke Indonesia dan masih terpisah dari orangtua dan keluarga mereka, diberikan kesempatan untuk kontak dan reuni keluarga, termasuk diberikan pilihan bebas untuk pulang ke Timor-Leste, sejalan dengan Pasal 9 dan 10 CRC.
- 4.2.8. Pertimbangan khusus diberikan bagi keadaan anak-anak Timor-Leste yang dirugikan dalam kesempatan mengakses pendidikan dan dalam segi-segi lain akibat kegiatan klandestin dan pengorbanan mereka sebagai pemuda demi pembebasan Timor-Leste.

5. Hak asasi manusia di Timor-Leste: memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia melalui lembaga-lembaga yang efektif

5.1. Masyarakat sipil yang berfungsi secara efektif

Kebebasan-kebebasan yang diperlukan untuk berseminya masyarakat sipil diingkari selama sebagian besar sejarah penjajahan Timor-Leste dan ditindas secara kejam selama masa pendudukan Indonesia. Namun, masyarakat sipil timbul sebagai kekuatan positif dalam memperjuangkan perubahan di Timor-Leste sendiri maupun di Indonesia dan, bersama dengan masyarakat sipil internasional, memainkan peran yang sangat penting dalam perjuangan demi penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Peran ini serta kemandirian masyarakat sipil dan nilai-nilai inisiatif serta komitmen terhadap hak asasi manusia yang mengilhaminya, sama pentingnya saat ini. Selain pemerintah dan partai politik, masyarakat sipil adalah kendaraan utama bagi rakyat untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangan bagi pembentukan kebangsaan (*nation building*). Penting bahwa sektor ini dapat diberikan ruang gerak saat Timor-Leste menjalani masa transisi, dari oposisi ke interaksi yang positif antara Pemerintah dan masyarakat sipil.

Komisi merekomendasikan agar:

- 5.1.1. Dukungan dan dorongan terus diberikan kepada masyarakat sipil di Timor-Leste agar dapat memainkan perannya secara memadai dalam menyuarakan suara kaum miskin, memberikan sumbangan pada pembangunan, dan menjaga pertanggungjawaban Pemerintah dan sektor bisnis, dan agar kebebasan-kebebasan sipil dan politik yang mendasar yang diperlukan bagi sektor ini terus dihormati dan dijunjung.
- 5.1.2. Organisasi masyarakat sipil, sementara independensi dan keragaman mereka senantiasa dihargai, terus berupaya bekerjasama dengan organisasi nonpemerintah lainnya, baik yang nasional maupun internasional, baik untuk memastikan penggunaan sebaik mungkin dari sumberdaya yang terbatas dan dampak dari advokasi dan sumbangan mereka, maupun untuk menunjukkan atau membuktikan ikatan kuat mereka dengan masyarakat dan standar-standar demokrasi, profesionalitas, dan pertanggungjawaban yang setinggi mungkin dalam tiap-tiap organisasi.
- 5.1.3. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, sambil menghormati peran dan sifat independen masing-masing, perlu terus-menerus membangun jalur komunikasi langsung guna membina interaksi melalui dialog tentang kebijakan, konsultasi, pelatihan bersama, dan kerjasama operasional.
- 5.1.4. Pemerintah dan para penyandang dana terus memberikan bantuan dana, pelatihan, dan dukungan lainnya bagi masyarakat sipil di Timor-Leste guna memastikan bahwa masyarakat sipil Timor Leste mampu berpartisipasi penuh dan memainkan perannya secara konstruktif dan efektif.
- 5.1.5. Organisasi internasional hendaknya memberikan pelatihan khusus bagi LSM nasional agar LSM nasional dapat turut serta dalam proses pengawasan eksternal pada saat Pemerintah melaporkan pada PBB ketaatannya terhadap berbagai traktat hak asasi manusia.
- 5.1.6. Gereja Katolik dan komunitas agama lain terus melanjutkan upayanya membangun budaya perdamaian dan hak asasi manusia di tingkat masyarakat, memberikan bantuan pada para korban pelanggaran hak asasi manusia, dan memperkuat rekonsiliasi dan kohesi sosial.

5.2. Parlemen Nasional yang efektif

Di bawah Portugal dan Indonesia, Timor-Leste memiliki lembaga-lembaga legislatif, tapi badan-badan tersebut tidak mewakili rakyat ataupun bertanggung jawab kepada rakyat, dan lebih melayani kepentingan mereka yang berkuasa ketimbang melayani rakyat. Sistem ini telah digantikan oleh suatu sistem demokrasi di mana sebuah parlemen dipilih secara bebas oleh rakyat yang memegang kedaulatan. Sistem baru ini terutama dicirikan oleh sikap tanggap dan pertanggungjawaban kepada rakyat, melalui fungsi legislatifnya, dan juga, atas nama rakyat, melalui fungsi sebagai pencermat dan pengawas atas penguasa eksekutif dan layanan publik, termasuk mencermati dan mengawasi penggunaan dana publik atau negara.

Komisi merekomendasikan agar:

- 5.2.1. Para anggota Parlemen Nasional diberikan sarana dan sumberdaya yang layak agar dapat melakukan tugasnya secara efektif atas nama rakyat.
- 5.2.2. Parlemen Nasional dan para anggota Parlemen terus memperkuat fungsi perwakilan mereka dan menunjukkan pertanggungjawaban mereka kepada rakyat melalui mekanisme seperti pelaporan secara rutin pada rakyat yang diwakilinya, mengunjungi distrik-distrik, dan mengadakan interaksi dengan masyarakat, mengadakan pertemuan dengan rakyat, dan berkomunikasi melalui media.
- 5.2.3. Parlemen Nasional dan para anggota Parlemen mengadakan program tetap yang bertujuan menginformasikan dan mendidik masyarakat tentang peran Parlemen Nasional, terutama antara kawula muda dan di sekolah-sekolah; hal ini akan membantu memberantas rasa keterasingan yang diwarisi dari masa lalu dengan menambah pemahaman tentang peran Parlemen Nasional mewakili rakyat dan akan mendorong partisipasi baik melalui keikutsertaan dalam pemungutan suara maupun melalui peran yang lebih aktif lagi dalam politik serta penggunaan sistem politik tersebut.
- 5.2.4. Penguasa eksekutif dan para pelayan publik mengakui peran berdaulat Parlemen Nasional dan dalam semangat pertanggungjawaban dan kemitraan, Pemerintah dan pelayan publik perlu secara rutin bersedia mengadakan dialog tentang kebijakan, melakukan konsultasi, dan merespons pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari para anggota Parlemen Nasional atas nama rakyat.
- 5.2.5. Parlemen Nasional membuat undang-undang guna memenuhi kewajiban pelaporan Timor-Leste dalam hal ketaatan terhadap traktat-traktat hak asasi manusia yang telah diratifikasi.

5.3. Sebuah sistem peradilan yang efektif

Sebuah sistem peradilan yang independen dan berfungsi baik sangat penting dalam mengamankan kedaulatan hukum di Timor-Leste. Selama pendudukan Indonesia, sistem peradilan sangat cacat. Independensi peradilan dari pemerintah dikorbankan, dan sistem peradilan gagal melindungi hak-hak mendasar dari mereka yang tertuduh melalui proses hukum. Dengan demikian, hal ini secara mendasar menciptakan budaya impunitas dan rusaknya kedaulatan hukum serta dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Karena pengalaman ini, banyak rakyat Timor-Leste yang tidak memercayai sistem peradilan. Menurut pengalaman mereka, sistem peradilan selama masa mandat Komisi adalah sistem yang korup, tidak dapat diakses oleh rakyat, dan tercemar oleh politik. Inilah tantangan utama dalam membangun sebuah sistem peradilan baru.

Sebuah sistem peradilan yang adil, profesional, dapat diakses, dan efektif merupakan tumpuan dalam menciptakan kedaulatan hukum di Timor-Leste. Pengalaman membuktikan bahwa hak rakyat hanya dapat dilindungi apabila

terdapat cara yang efektif guna menjaga kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Tanpa pertanggungjawaban ini, hampir mustahil melindungi hak asasi manusia. Pengembangan sebuah sistem peradilan yang kuat dan independen di Timor-Leste adalah tonggak utama sebuah demokrasi baru. Pembangunan sistem peradilan tersebut perlu diberikan prioritas yang layak dari segi pendanaan dan kebijakan.

Komisi merekomendasikan agar:

- 5.3.1. Pemerintah menyelesaikan pembuatan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, yang mengikutsertakan pendefinisian yang layak terhadap kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.
- 5.3.2. Semua tindakan yang perlu guna memastikan independensi sistem peradilan perlu diambil, termasuk:
 - Otonomi administratif bagi Kantor Kejaksaan Agung dan pengadilan, selain juga dikembangkannya sebuah mekanisme pengangkatan hakim dan penetapan masa jabatan hakim yang bebas dari tekanan politik
 - Diprioritaskannya program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi para hakim Timor-Leste
 - Dikembangkannya jalur karier bagi para hakim, termasuk sistem pengupahan dan masa jabatan yang layak untuk mengurangi risiko timbulnya korupsi atau tekanan politik terhadap para hakim
 - Dikembangkannya sebuah sistem pengawasan independen, yang disahkan melalui undang-undang
- 5.3.1. Akses terhadap sistem peradilan bagi para warga negara Timor-Leste perlu dijamin dengan:
 - Memastikan bahwa terdapat jumlah hakim yang cukup di Timor-Leste dan bahwa fakultas-fakultas hukum di universitas dan sumberdaya lain yang diperlukan tersedia pada standar yang memadai
 - Memastikan bahwa terdapat jumlah pegawai peradilan terlatih yang memadai guna mendukung kegiatan pengadilan
 - Memastikan bahwa pengadilan dapat, dengan teratur, mengadakan persidangan di distrik
 - Memastikan bahwa warganegara Timor-Leste yang hadir di hadapan pengadilan dapat dibantu dalam proses hukum dalam bahasa ibunya
 - Menjamin independensi para jaksa
 - Mengalokasikan sumberdaya yang cukup bagi para pembela dan layanan pendukung paralegal untuk menjamin agar warga negara Timor-Leste, para tertuduh, dan korban, dapat memahami cara kerja sistem peradilan dan hukum
 - Memastikan bahwa orang yang ditangkap dibawa ke pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hukum, dan bahwa pengadilan dapat bersidang secepat mungkin guna menjamin hal itu

- 5.3.4. Sistem banding diperkuat agar dapat membantu penerapan secara internal dari standar-standar legal internasional yang tertinggi.
- 5.3.5. Pemerintah memastikan bahwa sistem peradilan didanai secara penuh agar dapat memainkan fungsi-fungsi pentingnya dengan memberi prioritas yang tinggi dalam anggaran negara.
- 5.3.6. PBB dan masyarakat internasional terus mendukung pengembangan dan penguatan sistem hukum dan peradilan di Timor-Leste untuk menjamin pertanggungjawaban di hadapan hukum.

5.4. Aparatur pemerintah yang efektif

Pelayanan publik di Timor-Leste selama pendudukan Indonesia mempunyai banyak aspek negatif dari birokrasi Indonesia karena memang pelayan publik di Timor-Leste merupakan bagian dari birokrasi Indonesia: sistem yang terpolitisasi, tersentralisasi, top-down, korup, kelebihan staf, tidak efisien, membuang-buang sumberdaya Pemerintah, dan tidak dipercaya oleh masyarakat. Mereka yang mempunyai koneksi dengan kelompok elite lokal dan aparat pemerintah mendapat akses lebih cepat dan lebih murah terhadap pelayanan-pelayanan mendasar. Kaum miskinlah yang paling disengsarakan akibat pelaksanaan pelayanan publik yang penuh korupsi, suap, dan berbiaya tinggi, serta yang mengutamakan koneksi pribadi.

Dewasa ini, sistem di Timor-Leste, sebagaimana halnya dengan sistem di Indonesia, masih lemah dan terperangkap dalam “keterasingan institusional”, antara struktur lama dan berkembangnya institusi dan budaya baru. Untuk memberikan layanan ekonomi, sosial, dan budaya yang telah menjadi bagian dari hak asasi warga negara Timor-Leste, para pelayan publik harus tak berpihak secara politik, diangkat dan diberikan kenaikan pangkat berdasarkan prestasi, serta merupakan orang-orang yang penuh integritas dan berkemampuan secara profesional yang ditandai dengan etos yang kuat akan tugas dan pelayanan.

Komisi merekomendasikan agar:

- 5.4.1. Rekrutmen ke dalam pelayanan publik harus berdasarkan atas prinsip kesetaraan kesempatan dan prestasi, bukan berdasarkan atas afiliasi politik, dan perempuan harus diberikan dorongan untuk melamar dan menduduki posisi-posisi pemimpin dalam birokrasi Pemerintah.
- 5.4.2. Pelatihan yang diberikan pada para pelayan publik menekankan secara kuat prinsip kesetaraan hak bagi semua warga negara di Timor-Leste terhadap layanan yang mereka perlukan yang melindungi dan menjunjung hak ekonomi, sosial, dan budaya tanpa diskriminasi dan agar pelatihan ini diterapkan melalui evaluasi kinerja karyawan yang diadakan secara teratur, mendorong masukan dari masyarakat, termasuk apabila terdapat tuduhan suap, dan memberi penghargaan terhadap praktik-praktik terbaik.
- 5.4.3. Menteri-menteri dan aparat senior pemerintah, termasuk di distrik, perlu menerapkan pertanggungjawaban dengan menginformasikan pada warganegara tentang kebijakan dan layanan pemerintah, berkonsultasi

dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dan meluangkan waktu bagi media, dan melalui kehadiran secara rutin di Parlemen Nasional menjawab pertanyaan serta mendengarkan keprihatinan para Anggota Parlemen.

- 5.4.4. Tuduhan atau bukti adanya patronase, perlakuan istimewa, suap, atau penyalahgunaan aset dan peralatan milik Pemerintah, seberapa kecil pun, akan diselidiki dan ditangani secara langsung, tak berpihak, dan transparan; mereka yang dibuktikan bersalah akan dikenakan sanksi yang layak.
- 5.4.5. Anggaran, pengeluaran, dan audit departemen-departemen dan instansi Pemerintah diterbitkan dan dijadikan sasaran pencermatan publik.
- 5.4.6. Organisasi masyarakat sipil dan media menginformasikan pada para warganegara tentang hak mereka dalam hubungan dengan pemberian layanan dan pertanggungjawaban Pemerintah dan mengembangkan cara-cara pengakuan dan penghargaan terhadap praktik terbaik dalam pelayanan publik.

5.5. Ombudsman yang efektif

Sejarah Timor-Leste menunjukkan bagaimana institusi pemerintah yang tidak menghormati kedaulatan hukum cenderung punya kapasitas yang tidak seimbang yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Selama hampir semua jangka waktu yang diperiksa oleh Komisi, rakyat Timor-Leste hidup tanpa perlindungan kedaulatan hukum yang efektif maupun berfungsinya sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab secara finansial. Menjadikan ini sebagai norma adalah tantangan besar bagi pemerintah, masyarakat sipil (civil society), dan masyarakat.

Komisi sangat menghargai keputusan Pemerintah untuk mendirikan Kantor Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan, dan mengakui peran kunci yang dimainkan oleh lembaga mandiri ini dalam melindungi hak asasi manusia di Timor-Leste, termasuk hak-hak yang terganggu akibat korupsi di sektor pemerintah.

Komisi merekomendasikan agar:

- 5.5.1. Kantor Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan, agar dapat melakukan mandatnya untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah korupsi secara efektif, diberikan kebebasan penuh dan tingkat pembiayaan serta sumberdaya manusia yang memadai; Ombudsman melakukan tinjauan ulang terhadap semua undang-undang, kebijakan pemerintah dan prosedur yang berhubungan dengan pencegahan korupsi, dan melaporkan kepada Parlemen Nasional tentang perubahan yang diperlukan dalam menciptakan kerangka dan mekanisme hukum yang kuat demi memajukan integritas Pemerintah dan demi mencegah korupsi pada setiap tingkatan administrasi pemerintah.
- 5.5.2. Parlemen menyetujui undang-undang yang direkomendasikan oleh Ombudsman, dan semua sektor Pemerintah dan administrasi publik menerapkan rekomendasi Ombudsman tersebut dan diterapkan sistem pengawasan yang ketat.

- 5.5.3. Pemerintah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UN Convention against Corruption - UNCAC) yang ditandatangani pada Desember 2003.
- 5.5.4. Kantor Ombudsman mengadakan konsultasi secara teratur dengan masyarakat sipil dan masyarakat bisnis tentang masalah korupsi, menggunakan Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kerugian yang akibatkan oleh korupsi terhadap kaum miskin, terhadap pembangunan dan investasi asing, dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi seperti Transparency International untuk membuat laporan yang menyeluruh dan obyektif tentang Timor-Leste sebagai bagian dari Laporan Korupsi Global-nya.
- 5.5.5. Kantor Ombudsman bekerjasama dengan sektor swasta dan Kamar Dagang untuk membuat kode etik anti-korupsi untuk sektor bisnis dan agar sumberdaya dan pelatihan disediakan bagi tiap anggota Kamar Dagang.
- 5.5.6. Kantor Ombudsman dikembangkan menjadi lembaga negara yang dianggap rakyat dekat dengan komunitas dan masalah mereka dan yang dapat membantu mencari solusi yang cepat dan efektif terhadap kemungkinan atau telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dengan mengembangkan mekanisme peringatan dini di wilayah-wilayah di mana kekerasan diperkirakan muncul.

5.6. Komunitas Gereja yang efektif

Gereja Katolik mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah dan masyarakat Timor-Leste. Meskipun sebagian besar perannya terkompromikan selama zaman Portugis, Gereja adalah pembela hak asasi manusia yang kuat di Timor-Leste selama pendudukan Indonesia sejalan dengan doktrin sosial Gereja Katolik yang didasarkan atas martabat dan nilai setiap manusia. Bersama dengan komunitas religius lainnya, Gereja mempunyai tanggung jawab dan sumberdaya untuk melanjutkan perannya sebagai kekuatan utama hak asasi manusia dalam era demokratis yang baru ini.

Komisi merekomendasikan agar:

- 5.6.1. Gereja melanjutkan misinya melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Timor-Leste baik melalui pelayanannya bagi masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya, serta di mana perlu, melalui advokasi publik dalam membela hak asasi manusia.
- 5.6.2. Gereja, melalui perangkat-perangkatnya untuk keadilan dan perdamaian, menyediakan pelatihan hak asasi manusia bagi semua personelnnya, termasuk para seminaris, calon guru sekolah, para anggota ordo keagamaan, dan para katekis.
- 5.6.3. Gereja memikirkan kembali praktik-praktik masa lalu di mana perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dilarang turut serta dalam kehidupan utuh bergereja karena praktik ini menambah stigma sosial bagi mereka, dan Gereja dianjurkan melihat apa yang harus dilakukan bagi para perempuan korban tersebut.

- 5.6.4. Gereja mengembangkan program pendidikan hak asasi manusia yang meliputi komponen tentang hak dan tugas seorang warganegara dan agar program tersebut disebarluaskan ke masyarakat melalui jaringan paroki dan sekolah-sekolahnya.

6. Hak asasi manusia di Timor-Leste: pelayanan keamanan yang melindungi dan memajukan hak asasi manusia

Membangun sebuah paradigma baru bagi pelayanan keamanan adalah salah satu tantangan terbesar bagi Timor-Leste. Tercakup di sini perlunya meniadakan model-model lama, terutama selama masa Indonesia, di mana aparat keamanan merupakan alat kekerasan dan bukan untuk melayani masyarakat, merupakan pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia, tidak bertanggung jawab kepada kedaulatan hukum atau tunduk kepada kontrol sipil, dan tidak dipercayai oleh rakyat. Pemisahan peran antara militer dan polisi tidak didefinisikan secara jelas dan aparat keamanan berkembang menjadi berbagai kesatuan milisi, kelompok, dan jaringan yang tak terkendali dan memiliki peran dan loyalitas yang berbeda-beda. Militer memiliki fungsi ganda (dwifungsi), yang mengesahkan tak hanya peran pertahanan keamanan yang diembannya, tetapi juga campur tangan mereka dalam urusan sosial dan politik. Gerakan Resistansi Timor-Leste mengembangkan kebijakan yang mirip pada 1975 saat mereka melepaskan diri dari praktik Portugis yang menetapkan bahwa militer tidak boleh terlibat dalam politik (apartidarismo) dan terutama mendekatkan diri dengan Partai Fretilin hingga kebijakan ini dihapus dan digantikan oleh praktik kenetralan politik pada 1980-an.

Komisi mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah saat ini yang terfokus pada dibangunnya aparat keamanan yang netral secara politik dan profesional. Rekomendasi-rekomendasi berikut ini diharapkan akan memperkuat paradigma baru ini demi melindungi hak asasi manusia di Timor-Leste.

6.1. Sebuah kebijakan keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan

Komisi merekomendasikan agar:

- 6.1.1. Diadakan sebuah program pendidikan bagi masyarakat guna memperdalam pengetahuan mereka tentang kebijakan keamanan Timor-Leste dan tentang peran, keterbatasan, dan pertanggungjawaban kepolisian dan angkatan bersenjata.
- 6.1.2. Program pendidikan ini menekankan dan menjelaskan hal-hal berikut ini:
 - kontrol demokratis terhadap kebijakan keamanan dan aparat keamanan oleh otoritas sipil (Presiden, Kabinet, dan Parlemen Nasional), sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi
 - tugas aparat keamanan untuk menjunjung hak asasi manusia dalam mematuhi kedaulatan hukum sebagaimana tercantang dalam Konstitusi dan undang-undang

- kewajiban aparat keamanan dan para anggota aparat keamanan untuk tidak terlibat dalam kehidupan politik dan dalam kondisi apapun tidak boleh menggunakan sumberdaya yang tersedia bagi aparat keamanan untuk tujuan politik sebagaimana terjadi di masa lalu
- tugas aparat keamanan untuk menaati kebijakan keamanan nasional sebagaimana dikemukakan oleh Parlemen Nasional guna menjamin agar (a) terdapat pemisahan peran yang jelas; (b) mencegah munculnya pelbagai kelompok agen sebagaimana terjadi di masa lalu; (c) tidak ada gangguan koordinasi yang menyebabkan persaingan antarkelompok dan pelanggaran seperti yang terjadi di masa lalu; (d) aparat keamanan tidak terpolitisasi sebagaimana terjadi di masa lalu; (e) bahwa anggaran keamanan dan pembelian senjata dan pembagiannya diawasi dan disetujui oleh Parlemen Nasional; dan (f) hak asasi manusia dari warga sipil tidak dilanggar pada saat-saat krisis nasional (misalnya keadaan darurat saat wewenang khusus diberikan pada aparat keamanan) sebagaimana terjadi di masa lalu
- peraturan tentang penangkapan oleh polisi dan hak-hak masyarakat dalam situasi semacam ini, agar tidak terulang lagi praktik penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran yang dapat terjadi dalam situasi seperti itu sebagaimana terjadi di masa lalu
- peraturan tentang perilaku polisi dalam menangani demonstrasi publik, untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia sebagaimana yang terjadi di masa lalu dalam situasi tersebut

6.2. Kepolisian

Komisi merekomendasikan agar:

- 6.2.1. Parlemen Nasional hendaknya memainkan peran yang aktif sebagai mekanisme pengawas sipil tertinggi atas Kepolisian dan menerima laporan rutin dari Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas Kepolisian dan bertanggung jawab pada Parlemen.
- 6.2.2. Para anggota Kepolisian harus bertanggung jawab atas tindakan mereka apabila melanggar hukum dan polisi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia harus dihadapkan ke pengadilan biasa dan tidak dilindungi oleh polisi atau prosedur internal.
- 6.2.3. Ditetapkan prosedur dan mekanisme untuk melaporkan keluhan tentang perilaku polisi, dalam kerjasama dengan Kantor Ombudsman, untuk menghapus praktik masa lalu di mana aparat keamanan menikmati impunitas dan masyarakat mempunyai kemungkinan yang kecil untuk menuntut keadilan.
- 6.2.4. Sebuah perubahan paradigma dalam budaya kepolisian dibina dengan tujuan untuk menggantikan mentalitas “pasukan polisi” dengan sebuah tekanan yang lebih kuat pada pendekatan pelayanan masyarakat dalam kepolisian.

- 6.2.5. Selain pelatihan teknis, semua anggota polisi, termasuk perwira senior, menerima pelatihan berkelanjutan tentang teori maupun praktik tentang hak asasi manusia sebagai bagian dari pengembangan profesional mereka sebagai pelindung hak asasi manusia.
- 6.2.6. Semua anggota polisi, termasuk perwira senior, menerima pelatihan berkelanjutan mengenai kejahatan berbasis gender dan hak para korban dalam kasus semacam itu.
- 6.2.7. Disediakkannya pelatihan spesialisasi dan berkelanjutan mengenai pengumpulan barang bukti, praktik forensik, dan cara interogasi yang layak untuk mengurangi risiko bahwa polisi akan mengumpulkan bukti dari pengakuan yang diperoleh di bawah paksaan.
- 6.2.8. Polisi menghormati hak organisasi masyarakat sipil untuk memantau kegiatan polisi guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dan, dalam kerjasama dengan organisasi-organisasi tersebut, dapat mengembangkan prosedur untuk menjamin akses bagi kegiatan pemantauan tersebut.
- 6.2.9. Para anggota kepolisian Timor-Leste didorong untuk turut serta dalam operasi penjagaan perdamaian internasional di bawah mandat PBB demi menambah pengalaman mereka tentang praktik terbaik internasional dalam kepolisian.

6.3. Angkatan Bersenjata

Komisi merekomendasikan agar:

- 6.3.1. Parlemen Nasional menetapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa Parlemen mengawasi Angkatan Bersenjata secara efektif.
- 6.3.2. Para anggota angkatan bersenjata harus diperlakukan sebagai warganegara Timor-Leste, tidak diperlakukan sebagai kasta yang terpisah dan berdiri di atas hukum dan norma-norma masyarakat, sebagaimana terjadi di masa lalu, dan sejalan dengan itu, akan diadili di pengadilan biasa apabila terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia.
- 6.3.3. Peran Angkatan Bersenjata terbatas hanya pada pembelaan tanah air dari ancaman luar dan membantu rakyat seandainya terjadi bencana nonmiliter sebagaimana ditentukan oleh Parlemen Nasional; penggunaan militer sebagai alat represi dalam negeri, sebagaimana terjadi di masa lalu, dilarang di Timor-Leste.
- 6.3.4. Para anggota Angkatan Bersenjata pada semua tingkat tidak boleh memainkan peran dalam dunia politik atau bisnis dan hanya boleh menerima perintah dari lembaga-lembaga negara yang berwenang secara hukum.
- 6.3.5. Pengembangan kesatuan sipil sebagai perpanjangan dari militer melalui kelompok semi-militer atau kelompok intelijen dilarang karena di masa lalu praktik semacam itu telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan menjadi penyebab utama timbulnya perpecahan dalam masyarakat.
- 6.3.6. Pelatihan berkelanjutan menyangkut hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, dan pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada para anggota Angkatan Bersenjata, termasuk para perwira senior.

- 6.3.7. Dialog berkelanjutan antara organisasi-organisasi hak asasi manusia tingkat nasional dengan Angkatan Bersenjata tentang hak asasi manusia dan peran masyarakat sipil dan peran militer profesional dalam demokrasi dianjurkan.
- 6.3.8. Para anggota Angkatan Bersenjata didorong untuk turut serta dalam operasi penjagaan perdamaian internasional di bawah mandat PBB demi menambah pengalaman mereka tentang praktik terbaik internasional dalam militer.
- 6.3.9. Angkatan Bersenjata agar tidak melakukan kegiatan pelatihan bersama dengan militer dari negara lain yang diketahui dan terbukti mempunyai catatan hak asasi manusia yang buruk dan apabila ada keraguan tentang hal ini, hendaknya Parlemen Nasional yang memutuskan tepat-tidaknya pelatihan itu.

6.4. Badan-badan keamanan lain

Selain angkatan bersenjata dan polisi, berbagai kelompok dan jaringan keamanan berbasis komunitas bermunculan dari kedua pihak selama masa konflik. Kelompok-kelompok yang berpihak pada Indonesia secara khusus adalah bagian dari doktrin 'pertahanan rakyat semesta' dan dengan demikian didukung dan dipersenjatai oleh negara dan bertanggung jawab atas serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tanpa dikenai hukuman.

Guna memastikan agar hal tersebut tak terulang lagi di Timor-Leste hingga merugikan hak asasi manusia, Parlemen Nasional harus mengambil tanggung jawab untuk berperan sebagai pengawas akhir terhadap masalah-masalah serta kebijakan keamanan.

Komisi merekomendasikan agar:

- 6.4.1. Badan-badan keamanan negara seperti badan-badan kesatuan intelijen harus diatur secara tegas oleh hukum, diawasi dan diminta pertanggungjawabannya apabila tindakan-tindakan mereka menyimpang dari mandat hukum mereka.
- 6.4.2. Para perwira yang bekerja di badan-badan keamanan ini hendaknya ikutserta dalam pelatihan tentang peran badan-badan tersebut dalam sebuah negara demokratis dan juga menerima pelatihan tentang hak asasi manusia.
- 6.4.3. Badan-badan intelijen dan keamanan negara perlu dikoordinasi dan tunduk pada pengawasan Parlemen.
- 6.4.4. Undang-undang ditetapkan oleh Parlemen Nasional tentang badan-badan keamanan yang bukan badan negara di mana, antara lain, ditentukan bahwa perusahaan sekuriti swasta diwajibkan menerima pelatihan dari Kepolisian dan pelatihan dalam hak asasi manusia, dan semua badan sekuriti swasta tersebut wajib terdaftar.

7. Keadilan dan kebenaran

Apa yang terjadi pada 20 Agustus 1982 banyak orang kita yang meninggal, para perempuan diperkosa, menjadi janda, anak-anak kehilangan orangtuanya, banyak yang jatuh ke dalam kemiskinan, banyak yang masih trauma...apakah hanya dengan mengambil pernyataan dari rakyat, bisa menyelesaikan [masalah kita] dan menyembuhkan hati kita yang terluka? Apakah dengan membawa orang-orang yang melakukan kejahatan ke pengadilan, bisa mengobati hati kita yang terluka?

Surat dari rakyat Desa Mau Chiga (Hatu Bulico, Ainaro) 31 Mei 2003

Komisi telah mendengarkan pengalaman para korban pelanggaran berat hak asasi manusia dari semua distrik di Timor-Leste. Dalam mencatat hampir 8.000 pernyataan individu dan mendengarkan kesaksian mereka di acara-acara audiensi publik pada tingkat nasional, subdistrik, dan desa, Komisi telah berupaya memahami lebih baik tentang tuntutan rakyat akan keadilan bagi kejahatan yang telah terjadi di masa lalu. Komisi memahami bahwa tuntutan dan kebutuhan tiap-tiap korban mungkin berbeda, dan bahwa satu solusi saja tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan dari semua korban. Dari hubungan yang telah dijalin dengan para korban pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor-Leste, Komisi menyimpulkan bahwa tuntutan akan keadilan dan pertanggungjawaban tetap merupakan masalah mendasar dalam hidup banyak orang Timor-Leste dan adalah suatu kendala potensial dalam membangun masyarakat demokratis berdasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan hukum dan rekonsiliasi yang sejati antara para individu, keluarga, komunitas, dan bangsa.

Komisi telah menyelesaikan tugasnya dalam mencari kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Komisi mampu melakukan tugasnya berkat iktidak yang baik terhadap para korban serta dengan menghormati martabat mereka dan hak mereka untuk menuntut keadilan atas kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Komisi berpendapat bahwa kebenaran adalah basis fundamental untuk mengejar keadilan dan membangun hubungan baru yang didasarkan pada kejujuran dan rasa saling menghormati. Selain langkah-langkah yang perlu diambil yang berkaitan dengan keadilan, Komisi berpendapat bahwa kebenaran harus ditetapkan dalam Laporan Akhirnya agar dapat dibaca secara luas oleh rakyat Timor-Leste dan oleh generasi mendatang, dan oleh Pemerintah dan rakyat berbagai negara yang mempunyai keterlibatan dalam sejarah Timor-Leste. Pelestarian, penyebaran, serta pengembangan materi pendidikan adalah aspek-aspek penting yang harus ditindaklanjuti, sebagai warisan dari kegiatan Komisi dan untuk menghargai kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat Timor-Leste kepada Komisi.

7.1. Keadilan untuk pelanggaran dari masa lalu

Temuan laporan ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste tersebar sepanjang sebagian besar periode 25 tahun mulai 1974 hingga 1999. Masyarakat internasional telah menunjukkan kengeriannya akan kejahatan yang terjadi pada 1999, saat dunia menyaksikan pelanggaran-pelanggaran sistematis, yang diperburuk oleh kegagalan pemerintah Indonesia memenuhi kewajibannya menjamin keamanan. Faktor tambahan dalam kemarahan dunia internasional adalah pembunuhan staf PBB yang terjadi dalam kekerasan-kekerasan sekitar saat Jajak Pendapat.

Seberapa buruknya kejadian-kejadian itu, kejahatan yang terjadi pada 1999 jauh lebih berat daripada kejahatan-kejahatan yang telah terjadi selama 24 tahun pendudukan sebelumnya dan tidak dapat dipahami atau ditanggapi secara baik tanpa mengakui fakta-fakta seputar konflik berkepanjangan yang terjadi. Komisi didirikan pada waktu yang bersamaan dengan Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, sebagai bagian dari upaya memerangi impunitas dan perjuangan untuk mencapai rekonsiliasi yang sejati.

Komisi mengakui berbagai kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat internasional dan beberapa Pemerintah yang terlibat dalam upaya mencari penyelesaian bagi masalah kejahatan berat 1999. Komisi mencatat bahwa, dalam proses ini, masyarakat internasional memberikan sedikit perhatian atau tidak samasekali, terhadap masalah keadilan untuk kejahatan berat yang dilakukan di Timor-Leste selama 23 tahun sebelum terjadinya kekerasan 1999. Sekarang Komisi telah melaporkan tentang kebenaran terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan adalah bagian dari mandatnya untuk menarik kesimpulan yang layak berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan tidak berdasarkan atas pertimbangan politik. Temuan Komisi menunjukkan bahwa belum ada langkah-langkah keadilan yang layak atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor-Leste selama jangka waktu 25 tahun yang dicakup oleh mandat Komisi. Berdasarkan mandat Komisi, yang berlandaskan penghargaan terhadap hukum internasional, Komisi menyimpulkan bahwa keadilan untuk kejahatan di masa lalu harus mencakup pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama jangka waktu 25 tahun dari mandat tersebut.

Warisan dari kurangnya keadilan selama bertahun-tahun pelanggaran hak asasi manusia ini bermacam-macam. Akibatnya bagi Timor-Leste dan Indonesia adalah bahwa impunitas telah menjadi praktik yang mengakar. Mereka yang merencanakan, memerintahkan, melakukan, dan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat pun belum diminta pertanggungjawabannya, dan banyak di antara mereka yang karier militer dan sipilnya malah berkembang oleh karena aktivitas-aktivitas mereka. Dalam konteks seperti ini, penghormatan terhadap kedaulatan hukum dan institusi-institusi negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan, yang merupakan tonggak-tonggak fundamental dalam transisi demokratis di Indonesia dan pembangunan kebangsaan di Timor-Leste, akan senantiasa lemah.

Konflik di Timor-Leste bersifat internal selama konfrontasi pada Agustus-September 1975, saat Timor masih merupakan wilayah yang berpemerintahan sendiri di bawah pemerintahan Portugis. Dengan masuknya Indonesia ke dalam wilayah Timor-Leste sejak Oktober 1975, konflik merebak menjadi konflik internasional. Lepas dari jenis konflik itu sendiri, kejahatan yang dilakukan selama masa panjang ini telah mencapai tingkat yang begitu ekstrem sehingga sudah merupakan tanggung jawab masyarakat internasional.

Selain jenis kejahatan yang terjadi, kondisi di mana kejahatan tersebut terjadi melibatkan tanggung jawab masyarakat internasional. Komisi diyakinkan bahwa Negara Timor-Leste yang masih baru dan masih rentan keberadaannya, tidak dapat diharapkan sendiri menanggung beban berat dari tugas mengejar keadilan. Juga merupakan suatu keprihatinan bahwa Negara Indonesia belum pernah menunjukkan iktikad baik dalam membawa para pelaku ke hadapan proses pertanggungjawaban, bukan saja untuk kejahatan yang dilakukan pada 1999, tapi untuk kejahatan apapun yang dilakukan selama masa pendudukan. Karena itu, Komisi berpendapat bahwa suatu pendekatan definitif untuk mencapai keadilan atas kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste harus bertumpu pada komitmen masyarakat internasional, terutama PBB. Mereka harus memberikan dukungan tak bersyarat pada lembaga-lembaga keadilan yang kuat, yang dapat bertindak secara independen terhadap situasi politik di dalam dan di luar Timor-Leste.

Komisi sadar bahwa rumusan apapun bagi penyelesaian impunitas dalam kejahatan yang dilakukan dalam 24 tahun konflik dan pendudukan akan merupakan rumusan yang rumit dan sulit dicapai. Tetapi, setidaknya beberapa elemen harus diidentifikasi. Rumusan apapun yang mencari keadilan untuk para korban harus didasarkan pada penghormatan terhadap hukum internasional dan pada jaminan akan proses peradilan yang benar. Pada sisi yang sama, rumusan apapun bagi keadilan memerlukan dukungan praktis bukan saja dari PBB melainkan juga dari setiap negara, yang siap membantu proses keadilan dalam berbagai cara. Pada akhirnya, tanggapan apapun terhadap impunitas harus menghadapi tantangan bagaimana memastikan agar para pelaku utama pun bertanggung jawab, terlepas dari perlindungan yang mereka nikmati saat ini.

Komisi menyadari bahwa ketika laporan ini diterbitkan, Komisi Ahli Internasional yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk meninjau proses keadilan untuk 1999 telah mengeluarkan rekomendasi-rekomendasinya. Dengan demikian, sementara Laporan ini akan mengemukakan berbagai pemikiran tentang kasus-kasus tahun 1999, kami juga akan mengikutsertakan rekomendasi-rekomendasi tentang kejahatan yang dilakukan sebelum 1999 yang, sayangnya, menerima perhatian yang sangat kurang.

Komisi merekomendasikan agar:

- 7.1.1. Unit Kejahatan Berat dan Panel-panel Khusus di Timor-Leste agar diperbaharui mandatnya oleh PBB dan sumberdaya yang mereka miliki ditingkatkan agar dapat melanjutkan penyelidikan dan mempersiapkan kasus-kasus yang terjadi selama periode 1975-1999.

- 7.1.2. Pembaharuan mandat perlu didasarkan atas kondisi-kondisi yang mendasari pembentukan lembaga-lembaga tersebut pada mulanya—yaitu, bergantung secara langsung pada PBB dan bukan pada sistem peradilan nasional Timor-Leste yang baru berdiri dan belum siap menangani tantangan teknis dan politik dari kasus-kasus tersebut.
- 7.1.3. Berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan sebelum 1999, hendaknya pekerjaan Unit Kejahatan Berat mencakup investigasi dan persiapan persidangan kasus-kasus dari periode sejarah berikut ini, yang diputuskan oleh Komisi merupakan kasus contoh dan sangat penting dalam hal skala dan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi:
- Pembunuhan terhadap pemuda yang berafiliasi dengan Fretilin di Manufahi pada atau sekitar 28 Agustus 1975 oleh para pelaku yang berkaitan dengan UDT
 - Pembunuhan terhadap para tahanan yang berkaitan dengan UDT dan Apodeti oleh pelaku yang berhubungan dengan Fretilin di Aileu, Maubisse, dan Same pada Desember 1975 dan Januari 1976
 - Pembantaian terhadap warga sipil yang dilaporkan terjadi di Desa Kooleu di Distrik Lautém oleh para pelaku yang mempunyai hubungan dengan Fretilin pada Januari 1976
 - Pembunuhan terhadap anggota Fretilin dan sekutu-sekutunya oleh anggota dan sekutu Fretilin lainnya selama perpecahan partai pada 1976, dan terutama 1977
 - Pembantaian terhadap warga sipil di Dili pada hari invasi besar-besaran dari militer Indonesia 7 Desember 1975, dan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi pada hari-hari berikutnya
 - Operasi-operasi pengepungan dan penghancuran oleh militer Indonesia pada 1977-79
 - Pembantaian terhadap warga sipil oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di dan sekitar Desa Kraras, Distrik Viqueque, mulai 1983
 - Kebijakan dan praktik mengasingkan warga sipil ke Pulau Ataúro mulai dari awal 1980-an
 - Pembantaian Santa Cruz pada 12 November 1991, dan penahanan, penyiksaan, sertapembunuhan yang dilaporkan berkaitan dengan kejadian itu
- 7.1.4. Unit Kejahatan Berat yang telah diperbaharui mandatnya menyiapkan dakwaan bagi kasus-kasus di atas dan Panel-panel Khusus, sesudah mengkaji ulang secara layak, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka yang dituduh melakukan kejahatan berkaitan dengan tiap kasus tersebut dan meminta dialihkannya para tertuduh tersebut kepada otoritas mereka.

- 7.1.5. Lembaga-lembaga angkatan bersenjata Indonesia dan mereka yang memegang tanggung jawab komando yang disebut dalam Bagian 8: Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas dari Laporan ini, untuk kejahatan selain yang tercantum dalam daftar di atas, hendaknya diinvestigasi secara terfokus dan dituntut oleh pihak yang berwenang di Indonesia.
- 7.1.6. Daftar para pelaku yang diduga bertanggung jawab yang diserahkan pada Presiden Timor-Leste oleh Komisi agar dirujuk pada Kantor Kejaksaan Agung untuk penyelidikan dan tindakan selanjutnya.
- 7.1.7. PBB menetapkan prosedur pelestarian dan pengelolaan semua bukti yang dikumpulkan oleh Unit Kejahatan Berat, sehingga materi ini dapat digunakan untuk penuntutan sebagaimana seharusnya dan agar dukungan teknis dan keuangan berkelanjutan yang diperlukan untuk itu disediakan oleh PBB.
- 7.1.8. Semua bukti yang dikumpulkan oleh CAVR, Komnas HAM Indonesia, dan Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia mengenai Timor-Leste dan lain-lainnya dijaga secara layak sehingga materi ini dapat digunakan untuk penuntutan sebagaimana perlu.
- 7.1.9. Masyarakat internasional mendesak Indonesia dan mendukung upaya Indonesia untuk mendeklasifikasi atau membukakan semua informasi yang berada dalam tangan pasukan keamanan Indonesia sehingga materi itu dapat digunakan dalam proses-proses peradilan.
- 7.1.10. Diciptakannya suatu sistem perlindungan yang layak bagi korban dan saksi sebagai bagian dari proses keadilan, baik untuk kejahatan yang dilakukan pada 1999 dan kejahatan yang dilakukan dalam tahun-tahun sebelumnya.
- 7.1.11. Dalam semangat rekonsiliasi yang sesungguhnya serta dengan maksud untuk memperkuat sistem demokratiknya sendiri yang baru tumbuh, Indonesia didorong untuk memberikan sumbangan terhadap pencapaian keadilan dengan (a) memindahkan mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang saat ini tinggal di Indonesia, ke wewenang Panel-panel yang diperbaharui, dan (b) memperkuat kemandirian dan efisiensi sistem peradilannya sendiri agar dapat benar-benar mengejar keadilan dan menghapuskan noda impunitas yang sayangnya telah menjadi hal yang lumrah berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste.
- 7.1.12. Masyarakat internasional menunjukkan komitmennya terhadap proses keadilan dan proses Kejahatan Berat dengan, antara lain:
 - memastikan bahwa aparat penegak hukum mereka dapat mentransfer para tertuduh kepada mekanisme Kejahatan Berat yang didirikan oleh PBB, untuk mengadili para tertuduh menurut hukumnya sendiri atau untuk mengekstradisi mereka ke yurisdiksi yang benar-benar berniat mengadili mereka
 - memastikan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan yang diuraikan dalam Laporan ini tidak diperkenankan melanjutkan karier mereka, tanpa memandang kejahatan apa yang mereka lakukan

- mendirikan sebuah badan investigasi tertentu di bawah naungan PBB untuk menyelidiki besaran, jenis, dan keberadaan aset milik mereka yang dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste
- membekukan aset-aset dari mereka yang didakwa melakukan kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste, tunduk pada hukum nasional dan internasional, dan menantikan persidangan kasus-kasus di hadapan pengadilan yang berkaitan
- Memberlakukan larangan melakukan perjalanan terhadap mereka yang dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste
- Menghubungkan bantuan dan kerjasama internasional dengan langkah-langkah tertentu yang diambil oleh Indonesia menuju pertanggungjawaban, seperti bekerjasama dalam proses-proses Kejahatan Berat, pemeriksaan terhadap para pelaku yang masih terus berkariyer sebagai aparat negara, dan pemeriksaan terhadap aparat keamanan Indonesia dalam misi penjagaan perdamaian dan program-program pelatihan guna menjamin bahwa para tertuduh tidak turut serta

7.2. Pengadilan Internasional

Komisi merekomendasikan agar:

- 7.2.1. PBB dan semua organ-organnya, khususnya Dewan Keamanan, terus waspada terhadap masalah keadilan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste selama diperlukan, dan bersiap menetapkan sebuah Pengadilan Internasional berdasarkan Bab VII Piagam PBB apabila langkah-langkah lain dianggap telah gagal memberikan keadilan yang cukup dan apabila Indonesia terus menghalangi keadilan.

7.3. Komisi Kebenaran dan Persahabatan

Saat Laporan ini hampir selesai, Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia mengumumkan didirikannya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (Commission for Truth and Friendship - CTF), sebuah mekanisme pencarian kebenaran bilateral yang bertujuan mengkaji ulang kejahatan-kejahatan yang terjadi pada 1999.

Komisi percaya bahwa tidak ada yang bisa menengguhkan hak korban akan keadilan dan menuntut apa yang telah hilang. Komisi beranggapan bahwa setiap upaya tambahan dalam pencarian kebenaran yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan pada 1999 harus dilaksanakan dengan niat baik, dalam pengertian bahwa tindakan tersebut memperkuat, bukannya melemahkan kesempatan untuk mendapatkan keadilan atas kejahatan. Walaupun pada saat yang bersamaan Komisi mengakui bahwa hasil investigasinya masih meninggalkan beberapa aspek untuk penelitian lebih lanjut, tetapi Komisi percaya bahwa hasil kerjanya dan Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus harus dihargai dan dilindungi dari penyangkalan. Setiap upaya pencarian kebenaran tambahan harus saling melengkapi, tidak bertentangan dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Komisi merekomendasikan agar Pemerintah dan Parlemen Indonesia dan Timor-Leste:

- 7.3.1. Menjamin bahwa Komisi Kebenaran dan Persahabatan diizinkan bertindak secara independen, imparial, dan obyektif, serta membuat rekomendasi yang layak menurut pendapatnya, termasuk kemungkinan adanya persidangan pidana selanjutnya dan kebijakan pemberian reparasi bagi para korban.
- 7.3.2. Mengharuskan agar nama-nama para tertuduh pelaku dibersihkan oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan hanya jika hal ini didasarkan pada proses peradilan yang konsisten dengan standar internasional.
- 7.3.3. Mengharuskan Komisi Kebenaran dan Persahabatan menghormati secara penuh peraturan berkaitan dengan akses terhadap informasi, di mana informasi tersebut diberikan berdasarkan jaminan kerahasiaan pada lembaga-lembaga sebelumnya, seperti Komisi ini atau badan-badan Kejahatan Berat, demi menjaga keselamatan para korban dan saksi.

7.4. Penyebaran Laporan Akhir di Timor-Leste

Laporan Akhir Komisi adalah dokumen nasional penting bagi Timor-Leste dan juga penting secara internasional. Rekomendasi-rekomendasi tentang penyebarannya terkandung dalam Bagian 1 Timor-Leste dan masyarakat internasional (paragraf 1.1 – 1.5, di atas). Meski laporan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban hukum Komisi, Laporan ini akan terus penting bagi generasi mendatang Timor-Leste dan dengan demikian harus dapat diakses secara luas.

Komisi merekomendasikan agar:

- 7.4.1. Laporan Akhir diterjemahkan ke dalam Bahasa Tetum dan disebarakan secara luas di Timor-Leste sehingga generasi kini dan mendatang dapat mengakses isi Laporan ini.
- 7.4.2. Kementerian Pendidikan Timor-Leste bekerjasama dengan lembaga penerus pasca-CAVR untuk menggunakan Laporan Akhir dan materi-materi Komisi lainnya dalam perancangan kurikulum dan materi pendidikan lainnya berkaitan dengan hak asasi manusia, rekonsiliasi, sejarah, hukum, studi tentang gender, dan bidang-bidang studi lainnya yang relevan.
- 7.4.3. Pemerintah Timor-Leste dan mitra donor internasional mendukung diperbanyaknya Laporan Akhir dan materi-materi terkait untuk memungkinkan kesinambungan program pendidikan ini.

7.5. Arsip-arsip CAVR

Komisi telah menjaga dan mengatur arsip-arsipnya sejalan dengan kewajiban hukumnya yang ditetapkan dalam Regulasi 10/2001. Arsip-arsip tersebut adalah bagian unik dari warisan nasional Timor-Leste dan terdiri atas ribuan catatan multimedia yang telah dipercayakan pada Komisi oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat di seluruh Timor-Leste, selain juga organisasi nasional dan internasional

serta pemerintah. Sebagian besar kesempatan untuk mengumpulkan informasi dan bahan-bahan ini tidak akan terulang lagi, sehingga arsip ini hendaknya melandasi upaya-upaya berkelanjutan untuk mengumpulkan, memulihkan, dan menyediakan bahan-bahan sejarah yang penting untuk rujukan, penelitian, dan penggunaan selanjutnya. Dukungan nasional dan internasional akan terus diperlukan dalam memastikan pelestarian dan pengembangan koleksi ini untuk menjadikannya salah satu sumber yang terbaik.

Komisi merekomendasikan agar:

- 7.5.1. Parlemen Nasional Timor-Leste mengesahkan undang-undang nasional yang mengatur pelestarian, pengaturan, dan penggunaan arsip-arsip nasional.
- 7.5.2. Arsip-arsip Komisi tetap dipelihara di tempat bekas Comarca Balide dan dikelola sebagai bagian dari arsip resmi nasional sesuai dengan kebijakan akses yang diputuskan oleh para Komisaris CAVR hingga saat ketentuan-ketentuan legislatif nasional telah ditetapkan.
- 7.5.3. Arsip-arsip ini menjadi bagian dari sebuah pusat hak asasi manusia yang aktif yang akan dikembangkan di tempat bekas Comarca Balide yang tujuannya secara keseluruhan adalah untuk mengenang, menghargai, dan belajar dari sejarah hak asasi manusia Timor-Leste.
- 7.5.4. Dukungan finansial diberikan oleh Pemerintah untuk pemeliharaan dan pengembangan pusat ini dan program penelitian dan pendidikan yang berkelanjutan.
- 7.5.5. Pemerintah Indonesia diminta mengembalikan kepada bekas Comarca Balide dokumen-dokumen apapun yang ada pada mereka yang berkaitan dengan pengelolaan penjara tersebut antara 1975 dan 1999, agar dokumen-dokumen tersebut dapat ditambahkan pada arsip yang telah ada.
- 7.5.6. Pemerintah Portugal diminta mengembalikan kepada bekas Comarca Balide dokumen apapun yang ada pada mereka yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan penjara tersebut sebelum 1975.

8. Rekonsiliasi

*Jeritan Anak Bangsa**

Saat itu terdengar suara bisikan nan indah
Detik-detik proklamasi kemerdekaan Timor Lorosae
Tapi mengapa anak-anak masih bergolak ke segala arah
Lorosae
20 Mei adalah hari kemerdekaan pertama
Hari saat engkau akan merasakan kebahagiaan yang sungguh tiada tara
Hari saat engkau akan menyaksikan dan mendengar anak-anakmu ramai
bertepuk tangan
Tertawa terbahak-bahak dan saling berpelukan
Tapi mengapa di antara mereka masih tampak wajah-wajah yang murung
Masih terdengar suara rintihan dan penderitaan
Engkau tidak merasa kekurangan dan kehilangankah, Lorosae?

Selama mandatnya, Komisi menyadari dengan prihatin berbagai perpecahan yang terdapat di antara rakyat Timor-Leste. Pada saat ditulisnya rekomendasi-rekomendasi ini, diperkirakan bahwa ribuan rakyat Timor-Leste masih tinggal di Indonesia, kebanyakan di Timor Barat, dan bahwa sebagian besar dari mereka telah memilih menjadi warganegara Indonesia. Beberapa di antaranya tinggal di kamp-kamp pengungsi, dan ada pula yang telah membangun hidup baru dalam 'pengasingan'. Perpecahan ini tidak saja terdapat antara orang Timor-Leste yang tinggal di Timor-Leste dan mereka yang tinggal di Indonesia, melainkan terdapat juga antara masyarakat kita sendiri di dalam negeri Timor-Leste yang baru merdeka. Meski sejumlah perpecahan ini yang disebabkan oleh ketegangan dan masalah baru, sering asal-usul konflik yang sekarang ini dapat dilacak ke perpecahan di masa lalu.

Komisi menanggapi perpecahan-perpecahan tersebut dengan pendekatan di berbagai tingkat. Pada tingkat pimpinan nasional, para pemimpin partai diminta untuk secara publik menjelaskan apa yang terjadi selama perang sipil 1975. Hari keempat Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76 pada Desember 2003 adalah tonggak penting dalam sejarah kehidupan politik Timor-Leste dan saat yang penting bagi semua rakyat Timor-Leste untuk dapat memahami lebih lanjut tentang peristiwa-peristiwa selama periode tragis ini dan mendengarkan para pemimpin menyatakan tanggungjawabnya masing-masing.

Pada tingkat akar-rumpun, Komisi memfasilitasi proses mediasi di mana para pelaku kejahatan yang lebih ringan dan merugikan masyarakat setempatnya secara sukarela dan terbuka mengakui kesalahannya sehingga mereka dapat direkonsiliasikan

.....
* Puisi yang dibacakan dan ditulis oleh Edy M Parada, seorang anak dari Viqueque yang tinggal di kamp pengungsi Naibonat di Timor Barat, Indonesia, diputarkan dari rekaman video selama Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Anak and Konflik, 29-30 Maret 2004.

dengan komunitas mereka. Lebih daripada 1.400 pelaku turut serta dalam proses ini dan berhasil menjalani proses rekonsiliasi komunitas.

Komisi berpendapat bahwa agar proses rekonsiliasi ini berjalan dengan efektif di Timor-Leste, proses ini harus melibatkan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dari semua sisi konflik politik, harus mencapai tingkat-tingkat tertinggi pimpinan nasional, dan berlanjut dalam tahun-tahun mendatang.

Rekonsiliasi dalam masyarakat umum

Kekerasan banyak terjadi pada tingkat masyarakat selama periode 1974-1999. Kekerasan dari perang sipil yang meletus di Dili pada 1975 dengan cepat menyebar ke komunitas-komunitas lainnya, mengadu tetangga dengan tetangga, dan bahkan mengadu sanak keluarga satu dengan lainnya. Militer Indonesia menciptakan organisasi perpanjangan intelijen dan paramiliter yang anggotanya terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang di komunitas mereka. Pada akhir 1998 dan pada 1999, kegiatan kelompok milisi yang dibentuk oleh TNI lebih menyorot dan memecah-belah berbagai komunitas.

Dari program Proses Rekonsiliasi Komunitas (Community Reconciliation Process - CRP) yang dijalankan oleh Komisi, tampak jelas kebutuhan berkelanjutan untuk membantu berbagai komunitas untuk menangani perpecahan yang disebabkan oleh konflik politik yang berkepanjangan. Komisi memuji berbagai masyarakat desa akan cara mereka mengadaptasi Proses Rekonsiliasi Komunitas supaya cocok dengan situasi lokal masing-masing. Komisi juga menghargai keberanian mereka yang berbicara dengan jujur dan terbuka tentang apa yang mereka lakukan yang merugikan individu dan masyarakat dan berupaya agar diterima kembali sebagai anggota penuh komunitas mereka. Komisi juga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya terhadap mereka yang telah dilanggar haknya dan meski demikian mampu dalam hati nuraninya untuk menerima kembali individu yang telah merugikan mereka. Komisi juga memberikan penghormatan khusus pada para pemimpin adat yang memberikan dukungan dan wewenang yang khas pada proses-proses ini.

Berdasarkan pengalaman bersama dengan masyarakat ini, Komisi mengetahui bahwa rekonsiliasi bukan merupakan suatu hal yang mudah atau dapat diselesaikan dengan cepat. Tidak dapat dicapai dengan satu langkah saja, atau dengan satu cara saja, dan orang tidak dapat diwajibkan melakukan rekonsiliasi berdasarkan keinginan sebuah lembaga atau oleh suatu negara. Tapi jelas pula di sini bahwa masyarakat, korban, dan mereka yang merugikan masyarakatnya sering bersedia menerima bantuan yang membantu mempersatukan mereka agar dapat menyelesaikan masalah-masalah masa lalu demi masa depan yang damai. Komisi juga berpendapat bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk menjamin suasana damai yang dicapai oleh berbagai komunitas di seluruh Timor-Leste sejak berakhirnya konflik.

Komisi merekomendasikan agar:

- 8.1. Pemerintah Timor-Leste mendirikan sebuah mekanisme yang berpusatkan pada masyarakat untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, berdasarkan

pada pengalaman dari Proses Rekonsiliasi Komunitas CAVR, dan bahwa mekanisme ini dimandatkan melalui undang-undang, dan diselenggarakan oleh sebuah lembaga nasional yang independen yang bekerja bersama dengan Kehakiman, polisi, dan pihak yang berwenang di tingkat lokal.

- 8.2. Prinsip dasar mekanisme ini adalah guna membantu masyarakat menyelesaikan konflik atau masalah setempat dalam kerangka kerja yang konsisten dengan kedaulatan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, tapi yang juga menghormati proses-proses adat dan keragaman budaya di Timor-Leste.
- 8.3. Mekanisme ini agar mempunyai fokus yang jelas terhadap peningkatan kapasitas para fasilitator komunitas setempat akan pencegahan dan penyelesaian konflik dan membantu kawula muda untuk membangun budaya dan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai.
- 8.4. Mekanisme ini agar dimandatkan untuk menangani konflik politik masa lalu yang telah terjadi di Timor-Leste, maupun tantangan terhadap perdamaian dan stabilitas masyarakat masa kini.
- 8.5. Lembaga pasca-CAVR yang direkomendasikan di bagian lain dari Laporan ini diminta untuk mengadakan konsultasi dengan Pemerintah dan masyarakat tentang usulan ini dan untuk mengajukan draf kerangka acuan untuk mekanisme ini kepada Parlemen Nasional.
- 8.6. Jaksa Agung untuk memutuskan dalam jangka waktu tiga bulan setelah dikeluarkannya Laporan ini tentang tindakan-tindakan yang akan diambil dalam hubungan dengan 85 kasus tertunda dari Proses Rekonsiliasi Komunitas yang masih menantikan putusan beliau, mengingat semua pihak dalam kasus-kasus tersebut meminta bantuan Komisi dengan iktikad baik, dan agar beliau memberitahukan putusannya tentang setiap kasus pada tiap pihak yang bersangkutan dan komunitas masing-masing.

9. Rekonsiliasi dalam kalangan politik Timor-Leste

Komisi berusaha memahami sebab-sebab yang mendasari konflik politik di Timor-Leste dan kekerasan yang dilakukan oleh orang Timor-Leste dan anggota militer Indonesia. Komisi mendengarkan keterangan dari korban kekerasan dari semua pihak, dan mewawancarai semua pemimpin politik dari semua sudut pandang, termasuk mengadakan wawancara di Indonesia. Komisi yakin bahwa perpecahan yang begitu dalam yang terdapat dalam tubuh masyarakat Timor-Leste dari 25 tahun konflik, dan kekerasan yang merasuki kehidupan politik Timor-Leste pada 1975, tetap menjadi rintangan yang mungkin menghambat perkembangan budaya demokrasi dan perdamaian yang berkesinambungan di Timor-Leste.

Kekerasan dan intimidasi tidak punya tempat dalam kehidupan politik Timor-Leste—risikonya terlalu besar. Kerendahan hati yang ditunjukkan oleh para pemimpin politik yang memberikan kesaksian pada Audiensi Publik Nasional

tentang Konflik Politik Internal 1974-76 dan tanggapan positif dari masyarakat terhadap keterbukaan mereka, membesarkan hati Komisi. Namun, masih banyak yang harus dilakukan untuk memulihkan luka yang dalam yang terjadi dari masa itu dan mengkonsolidasikan perkembangan kehidupan politik yang pluralistik dan damai di Timor-Leste.

Komisi merekomendasikan agar:

- 9.1.1. Semua partai politik memastikan bahwa prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang terkandung dalam Konstitusi Timor-Leste dihormati sepenuhnya dalam semua kebijakan dan praktik masing-masing partai.
- 9.1.2. Semua partai politik agar menghormati kenetralan Kepolisian, Angkatan Bersenjata, dan badan-badan keamanan negara lainnya dan mengikutsertakan komitmen untuk menghormati prinsip netralitas ini dalam kebijakan partai masing-masing.
- 9.1.3. Semua partai politik agar berjanji secara publik untuk mengadakan semua kegiatan politiknya dengan damai dan tidak mengintimidasi dan agar mengambil langkah-langkah disipliner yang tegas terhadap anggota partai yang mendorong atau menggunakan media untuk menyebarkan agresi atau ketakutan dalam masyarakat.
- 9.1.4. Semua partai politik berjanji secara publik bahwa tidak akan pernah memobilisasi kelompok pemuda untuk tujuan politik selain dengan cara damai dan legal.
- 9.1.5. Lima partai politik lama—Apodeti, ASDT/Fretilin, KOTA, Tralabista, dan UDT—menerapkan berbagai proses, bilamana perlu, untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di masa lalu oleh anggotanya atau mereka yang berafiliasi dengan partai-partai tersebut, dan melakukan upaya untuk penerapan rekomendasi dalam Laporan ini, terutama rekomendasi yang bertujuan melenyapkan ancaman kekerasan untuk selama-lamanya dari kehidupan politik di Timor-Leste.
- 9.1.6. Mantan kelompok politik pro-otonomi yang masih menunjukkan keberadaannya di Indonesia berusaha keras agar rekomendasi dalam Laporan ini dapat diterapkan, terutama rekomendasi yang bertujuan melenyapkan ancaman kekerasan untuk selama-lamanya dari kehidupan politik di Timor-Leste.
- 9.1.7. Program pendidikan kewarganegaraan menggunakan materi dalam Laporan ini menekankan pada masyarakat betapa pentingnya prinsip nonkekerasan dan akibat mengerikan yang harus ditanggung apabila terjadi kekerasan politik.
- 9.1.8. Kantor Presiden menerapkan upaya baru untuk membina dialog politik, sosial, dan budaya antara orang Timor-Leste di Indonesia dan di Timor-Leste, dan agar upaya-upaya tersebut melibatkan para pemimpin politik dari berbagai latar belakang dan dukungan dari Pemerintah Indonesia.

10. Rekonsiliasi dengan Indonesia

Sejak 1999, Timor-Leste dan Indonesia telah menunjukkan niat untuk membangun hubungan baru. Komisi memuji sikap yang progresif dan terbuka ini. Komisi berpendapat bahwa agar persahabatan ini dapat tumbuh, prinsip-prinsip mengakui kebenaran dari masa lalu, pertanggungjawaban atas kekerasan, dan semangat ingin membantu mereka yang telah menjadi korban kekerasan itu merupakan prinsip penting. Selama kegiatannya yang panjang di tingkat masyarakat, terutama dengan korban pelanggaran berat yang dilakukan oleh prajurit Indonesia, Komisi terkesan oleh betapa kemurahan hati para korban terhadap Indonesia. Masyarakat di berbagai pelosok negara telah menyatakan pada Komisi dengan jelas bahwa mereka ingin melihat keadilan atas kejahatan berat yang dilakukan selama konflik. Tetapi seruan untuk keadilan ini hampir tidak pernah dilontarkan dengan dendam atau benci, dan tidak dilontarkan secara umum melawan Indonesia atau orang Indonesia. Pertanggungjawaban oleh mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dan oleh pihak yang berwenang akan membukakan jalan menuju hubungan baru yang lebih dalam dan berdasarkan pada rekonsiliasi sejati.

Komisi merekomendasikan:

Kebenaran sebagai dasar hubungan:

- 10.1.1. Agar Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui telah menerima Laporan ini dan membahasnya dalam agenda kerja Parlemen Indonesia.
- 10.1.2. Demi membina semangat rekonsiliasi, Pemerintah Indonesia agar mengirimkan delegasi senior ke Timor-Leste untuk mengakui pelanggaran yang dilakukan oleh wakil pemerintah Indonesia selama pendudukan atas Timor-Leste dan meminta maaf pada para korban dan keluarga para korban atas pelanggaran tersebut.
- 10.1.3. Agar Pemerintah Indonesia melakukan merevisi catatan resmi pemerintah dan bahan-bahan pendidikan yang berkaitan dengan keberadaan Indonesia di Timor-Leste guna menjamin agar bahan-bahan tersebut memberikan gambaran yang akurat dan lengkap tentang periode 1974 - 1999 bagi rakyat Indonesia, termasuk peran PBB dalam menjalankan Jajak Pendapat 1999, dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap rekonsiliasi.
- 10.1.4. Agar Indonesia dan Timor-Leste melanjutkan upaya mengembangkan hubungan antarrakyat dan kerjasama dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Mengakui korban yang gugur di antara militer Indonesia dan membantu mereka dan keluarga mereka

- 10.1.5. Agar Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste melanjutkan kerjasama dalam memelihara makam prajurit Indonesia di Timor-Leste.
- 10.1.6. Agar Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste bekerjasama memberikan informasi pada keluarga Indonesia dan Timor-Leste yang tidak tahu

menahu tentang bagaimana meninggalnya anggota keluarga mereka atau tempat penguburan mereka yang dahulu ditugaskan sebagai prajurit di Timor-Leste.

- 10.1.7. Bahwa Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste bekerjasama membantu keluarga Indonesia yang ingin mengadakan kunjungan ke Timor-Leste untuk mengunjungi makam anggota keluarganya dan/atau untuk membawa pulang jasad anggota keluarganya kembali ke Indonesia.

Membukakan semua dokumentasi berkaitan dengan operasi militer yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil

- 10.1.8. Bahwa Pemerintah Indonesia memberikan akses bagi Pemerintah Timor-Leste dan masyarakat internasional atas catatan-catatan tentang operasi-operasi militer yang menyebabkan korban warga sipil yang mati atau cedera dan kerusakan terhadap harta benda, termasuk:
 - Operasi Seroja dan pembunuhan terhadap warga sipil di Dili pada 7 Desember 1975 dan pembunuhan pada hari-hari berikutnya
 - Operasi pengepungan dan pemusnahan militer pada 1977-1979
 - Serangan Mau Chiga pada 1982 di Distrik Ainaro; pembunuhan terhadap warga sipil di dan sekitar Desa Kraras pada 1983 di Distrik Viqueque
 - Pemindahan warga sipil ke Pulau Ataúro sejak awal 1980-an
 - Pembantaian Santa Cruz di Dili 12 November 1991 dan pembunuhan dan penghilangan paksa yang dilaporkan sesudahnya
- 10.1.9. Agar Pemerintah Indonesia membukakan informasi sebagai berikut kepada Pemerintah Timor-Leste dan masyarakat internasional:
 - nama dan perincian mengenai semua anggota ABRI/TNI yang asal-usulnya dari Timor-Leste yang terbunuh di Timor-Leste antara 1975 dan 1999
 - nama dan keterangan tentang semua anak-anak Timor-Leste yang dipindahkan dari Timor-Leste oleh Pemerintah Indonesia, militer, atau personel atau lembaga yang berkaitan antara 1975 dan 1999
 - nama dan perincian tentang semua tahanan politik yang meninggal dalam tahanan antara 1975 dan 1999
 - semua kesatuan militer Indonesia yang bertugas di Timor-Leste antara 1975 and 1999, termasuk nama-nama para komandan pasukan
 - informasi tentang pembentukan dan pendanaan unit-unit paramiliter Timor-Leste oleh militer Indonesia dan/atau instansi negara lainnya antara 1974 dan 1999
 - semua berkas dan catatan intelijen militer dan sipil tentang Timor-Leste antara 1974-1999

- semua informasi tentang pembelian dan penyumbangan senjata, peralatan, dan perlengkapan militer dari berbagai pemerintah dan perusahaan antara 1975 dan 1999 yang pernah digunakan di Timor-Leste selama periode ini
- 10.1.10. Agar Pemerintah Indonesia menyediakan kepada Pemerintah Timor-Leste dan masyarakat internasional semua catatan tentang keterlibatan pemerintah dan militer Indonesia dalam operasi 1999 yang menyebabkan terjadinya pembunuhan dan pemindahan paksa lebih daripada separuh penduduk Timor-Leste, termasuk:
- pembantaian Gereja Liquiçá, Distrik Liquiçá (6 April 1999)
 - pembunuhan-pembunuhan di Cailaco, Distrik Bobonaro (12 April 1999)
 - pembantaian di rumah Manuel Carrascalão di Dili (17 April 1999)
 - pembunuhan dua orang mahasiswa di Hera, Distrik Dili (20 Mei 1999)
 - pembantaian Gereja Suai, Distrik Covalima (6 September 1999)
 - pembantaian Kantor Polisi Maliana, Distrik Bobonaro (8 September 1999)
 - Pembunuhan para suster, pastor ,dan wartawan yang bersama mereka di Lospalos, Lautém (25 September 1999)
 - pembantaian Passabe dan Maquelab, Distrik Oecussi (September-Oktober 1999)
 - pembantaian Nitibe, Distrik Oecussi (Oktober 1999).
- 10.1.11. Agar Pemerintah Indonesia bekerjasama secara penuh dengan upaya internasional ataupun upaya Timor-Leste di masa depan yang berniat menangani masalah keadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Timor-Leste antara 1974 dan 1999.

Perdamaian dan stabilitas

- 10.1.12. Agar Pemerintah Indonesia terus menunjukkan secara jelas penghormatannya terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Timor-Leste dan menindak siapapun baik secara individu atau secara organisasi di Indonesia yang melakukan kegiatan ilegal yang bertujuan mengganggu stabilitas di Timor-Leste.

Membersihkan nama mereka yang telah salah dituduh

- 10.1.13. Pemerintah Indonesia menghapus catatan kriminal semua tahanan politik Timor-Leste yang pernah disidang dan diputuskan bersalah atas kejahatan yang berhubungan dengan pernyataan damai pendapat politik mereka selama masa konflik.
- 10.1.14. Pemerintah Indonesia memusnahkan semua arsip intelijen yang dimilikinya tentang orang-orang Timor-Leste selama periode 1974-1999.

- 10.1.15. Pemerintah Indonesia menghapus nama-nama aktivis hak asasi manusia yang berasal dari dalam dan luar Timor-Leste dari 'daftar hitam' Departemen Imigrasi Indonesia dan memerintahkan semua instansi intelijen dan kantor-kantor Pemerintah yang relevan untuk menghapus nama-nama tersebut dari daftar-daftar dan arsip-arsip mereka.

Reparasi

- 10.1.16. Pemerintah Indonesia memberikan sumbangan finansial pada Dana Perwalian untuk reparasi yang direkomendasikan di bagian lain dalam Laporan ini.
- 10.1.17. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang meraup keuntungan dari perang dan kegiatan terkait lainnya di Timor-Leste antara 1974 dan 1999 memberikan sumbangan finansial terhadap Dana Perwalian untuk reparasi yang direkomendasikan di bagian lain dalam Laporan ini.

11. *Acolhimento* (Penerimaan)

Dalam periode 25 tahun yang dicakup oleh mandat Komisi, orang Timor-Leste meninggalkan Timor-Leste karena alasan-alasan keamanan pribadi, keyakinan politik, atau karena mereka dipaksa melarikan diri. Ribuan orang yang meninggalkan Timor-Leste pada 1999 tetap berada di Timor Barat dan daerah-daerah lain di Indonesia. Ribuan lainnya meninggalkan Timor-Leste pada 1975 dan kemudian mereka bermukim di Portugal dan Australia, dan ada juga dalam jumlah yang lebih kecil yang tinggal di negara-negara lain di dunia. Anak-anak Timor-Leste yang dibawa ke Indonesia selama perang masih terpisah dari keluarganya.

Diciptakannya iklim penyambutan atau *acolhimento* untuk orang Timor-Leste yang ingin berkunjung atau kembali ke Timor-Leste harus dijadikan prioritas nasional. Hal ini akan memperkuat sifat inklusif dan demokratis masyarakat Timor-Leste dan meningkatkan kemampuan dan keamanannya dalam berbagai cara yang penting. Apabila orang Timor-Leste terlibat dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia, mereka harus ditindak sesuai dengan proses yang berlaku sejalan dengan komitmen nasional untuk membangun sebuah masyarakat yang berbasiskan pada pertanggungjawaban, kedaulatan hukum, dan hak asasi manusia.

Komisi merekomendasikan agar:

- 11.1.1. Diteruskannya upaya-upaya yang sedang berjalan untuk memajukan hubungan dan keinginan baik antara orang Timor-Leste di Timor-Leste dan di Indonesia, terutama Timor Barat, yang menekankan pertukaran sosial, budaya, dan pendidikan untuk anak-anak dan kawula muda, dan agar pemimpin masyarakat, Gereja Katolik, dan agama-agama lainnya, LSM Indonesia dan Pemerintah Indonesia diminta membantu proses-proses ini.
- 11.1.2. Dikembangkannya cara-cara membina hubungan Timor-Leste dengan orang Timor-Leste yang tinggal di luar negeri atau yang sudah menjadi warganegara lain sehingga orang Timor-Leste yang berada di luar negeri dapat didorong

untuk memelihara hubungan kekeluargaan, budaya, dan hubungan lainnya dengan negara asal mereka dan untuk berkontribusi bagi kepentingan Timor-Leste melalui kegiatan dan koneksi mereka di luar negeri.

11.2. Anak-anak yang terpisah

Banyak anak-anak Timor-Leste yang terpisah dari keluarganya selama pendudukan Indonesia terhadap Timor-Leste, termasuk sekitar 4.500 yang terpisah dari keluarganya pada 1999. Banyak di antara mereka yang terpisah sebelum 1999 yang sekarang sudah dewasa, termasuk juga mereka yang mencari keluarganya tapi tidak mengetahui asal-usul mereka. Kebanyakan dari mereka yang terpisah dari keluarganya selama kejadian 1999 telah dipertemukan kembali dengan keluarganya atau tetap bersama dengan mereka yang memungutnya. Tanggung jawab terhadap kategori ini ada pada Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste sesudah penandatanganan Memorandum Kesepahaman mengenai Kerjasama untuk Melindungi Hak Anak-anak yang Terpisah dan Pengungsi Anak pada Desember 2004, yang difasilitasi oleh UNHCR.

Komisi merekomendasikan agar:

- 11.2.1. Penerapan Memorandum Kesepakatan 2004 antara Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Republik Indonesia agar diawasi oleh LSM di kedua negara bersangkutan untuk menjamin perlindungan bagi hak-hak anak-anak yang terpisah, terutama mereka yang kasusnya masih belum diselesaikan dan mereka yang berada di tangan wali mereka—termasuk hak anak-anak tersebut untuk dengan bebas mengakses prosedur identifikasi dan kewarganegaraan.
- 11.2.2. Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia memastikan agar komunikasi yang teratur dan bebas tetap berjalan antara anak dan orangtuanya sementara anak itu masih berada dengan walinya atau dengan sebuah lembaga dan agar anak-anak yang terpisahkan dapat membuat keputusan tentang masa depan mereka, yang diambil berdasarkan informasi yang cukup, bebas dari intimidasi atau ketakutan.
- 11.2.3. Bantuan diberikan, terutama bagi mereka yang berada di tempat terpencil atau miskin, agar orangtua dan anak-anak yang terpisahkan dari orangtuanya, yang sekarang sudah dewasa, dapat mencari tahu tentang keberadaan masing-masing, berhubungan dan bertemu secara langsung.

12. Reparasi

Karena perang, saya dipakai seperti kuda oleh prajurit Indonesia yang memakai saya secara bergiliran dan membuat saya melahirkan banyak anak. Sekarang saya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk mendorong anak-anak saya ke masa depan yang lebih baik.

(Tamba funu ne'e nia hahalok hau hanesan kuda ida nebe militar Indonesia sira mai sae troka malun de'it no tau hela oan bar-barak mai hau. Nebe agora hau forsa laiha atu dudu sira ba oin).1

12.1. Pendahuluan

Komisi mendesak Pemerintah Timor-Leste untuk menerapkan sebuah program pemberian reparasi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang paling rentan.

Tidak ada orang Timor-Leste yang tidak tersentuh atau tidak menjadi korban konflik dalam bermacam-macam cara. Namun dalam kontaknya dengan banyak masyarakat, Komisi benar-benar mengetahui ada di antara kita yang tiap harinya masih menderita karena dampak dari konflik dan anak-anak mereka akan mewarisi keadaan merugikan yang dihadapi orangtua mereka karena statusnya sebagai korban. Termasuk di sini adalah mereka yang hidup dalam kemelaratan, yang cacat, atau yang karena kesalahpahaman, diasingkan atau didiskriminasikan oleh masyarakat tempat mereka berada. Kita semua adalah korban tapi tidak semua korban setara. Kita harus mengakui kenyataan ini dan mengulurkan tangan kepada mereka yang paling rentan.

Komisi berpendapat bahwa rekomendasi ini konsisten dengan:

- Konstitusi Timor-Leste yang menyatakan bahwa “Negara sepatutnya memberikan perlindungan khusus bagi mereka yang cacat akibat perang, anak yatim/piatu, dan tanggungan mereka yang telah memberikan nyawanya pada perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan nasional, dan akan melindungi mereka yang turut serta dalam perlawanan terhadap penjajahan asing (Pasal 11);
- mandat Komisi yang mensyaratkan Komisi harus membantu proses pemulihan martabat korban, mendorong rekonsiliasi [Regulasi 10/2001, Pasal 3.1(f) dan (g)], dan juga untuk membuat “rekomendasi berkaitan perubahan hukum, politik, administratif, atau tindakan lainnya yang harus diambil untuk mencapai tujuan Komisi untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia, dan menanggapi kebutuhan korban pelanggaran hak asasi manusia” [Regulasi 10/2001, Pasal 21.2.];
- Tradisi orang Timor-Leste, yang percaya bahwa seseorang yang mengalami atau menderita suatu pelanggaran mempunyai hak menerima sejumlah langkah-langkah untuk memperbaiki pelanggaran itu;
- Hukum hak asasi manusia internasional* yang menetapkan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perbaikan.

.....
* Prinsip dan panduan dasar tentang hak terhadap perbaikan dan reparasi untuk korban pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, disetujui oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 20 April 2005 [UN Doc. E/CN.4/RES/2005/35, Annex].

Sebuah program reparasi akan menjamin bahwa:

- Korban-korban yang paling rentan, yang sering terpinggirkan oleh masyarakat mereka, mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya;
- Suatu bentuk keadilan diberikan yang secara langsung memberikan manfaat pada korban dan membantu proses pemulihan bagi korban, membantu rekonsiliasi nasional dan pengurangan lebih jauh akan kemungkinan terjadinya kekerasan;
- Korban kekejaman masa lalu yang paling rentan akan diberikan pengakuan dan diberikan sarana untuk menikmati hak mendasar mereka dan untuk dapat memenuhi potensi mereka pada tingkat yang setara dengan warganegara Timor-Leste lainnya.

12.2. Reparasi dalam bentuk apa?

Selama kegiatannya, Komisi mendefinisikan reparasi sebagai langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk rehabilitasi, restitusi, kompensasi, pengakuan akan sebuah cerita yang benar tentang apa yang terjadi, dan jaminan tidak terulangnya pelanggaran ini. Reparasi dapat berupa berbagai langkah yang ditujukan kepada perorangan atau kepada sekelompok korban.

Komisi menempatkan reparasi dalam suatu kerangka kerja hak asasi manusia yang terdiri atas tiga komponen mendasar yang tidak dapat tergantikan satu dengan yang lain: kebenaran, keadilan, dan reparasi.

Beberapa bentuk reparasi

Kompensasi yang mencakup kompensasi yang adil dan layak melalui proses litigasi atau mediasi.

Restitusi yaitu pemulihan, sejauh mungkin, situasi penerima ganti rugi yang sebenarnya, sebelum terjadinya pelanggaran.

Rehabilitasi yaitu penyediaan perawatan medis dan psikologis dan pemenuhan kebutuhan pribadi dan masyarakat yang penting.

Restorasi martabat, yang mencakup bentuk-bentuk reparasi yang simbolis.

Penetapan kebenaran yang dapat mencakup pengakuan kesalahan dan permohonan maaf dari pelaku secara publik, dan kesaksian dari para korban dan keluarganya tentang pelanggaran dan efeknya dalam kehidupan mereka.

Jaminan tidak terulangnya pelanggaran yaitu diciptakannya langkah-langkah legislatif dan administratif yang menyumbang terhadap pemeliharaan masyarakat yang stabil dan pencegahan terulangnya pelanggaran hak asasi manusia.

12.3. Landasan hukum dan moral bagi reparasi

Dalam penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia Komisi telah mendengarkan para korban pelanggaran dari semua distrik di Timor-Leste, yang menjadi korban di tangan semua pihak dalam konflik. Hidup telah sangat berubah ke arah yang buruk bagi mereka yang selamat dari pelanggaran itu. Ribuan orang meninggal karena pelanggaran hak asasi manusia, meninggalkan banyak keluarga. Masih banyak keluarga yang terus mencari orang-orang yang dikasihi yang telah hilang. Terdapat ribuan korban perkosaan, penyiksaan, dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya yang masih hidup dan terus menderita dalam hidup keseharian mereka akibat pelanggaran ini.

Dalam audiensi dan lokakarya atau pemberian pernyataan dan wawancara yang diselenggarakan dengan para korban yang masih hidup ini, Komisi terkesan oleh kesederhanaan dari apa yang dicari sebagian besar korban. Secara berlimpah mereka menyatakan kepada Komisi bahwa yang mereka cari adalah secercah pertanggungjawaban dari pihak pelaku, dan bantuan yang sederhana yang akan memungkinkan mereka dan anak-anak mereka untuk berpartisipasi dengan yakin dalam Timor-Leste baru yang demokratis. Bagi banyak orang, partisipasi ini sangat sulit karena kesulitan berat yang masih mereka alami akibat pelanggaran yang mereka derita.

Sementara Timor-Leste berusaha mengukuhkan dirinya sebagai bangsa demokratis yang baru yang berdasar pada kedaulatan hukum dan penghormatan kepada hak asasi manusia, terdapat kewajiban moral yang mendalam untuk menjangkau dan membantu saudara-saudara kita laki-laki dan perempuan yang masih berjuang untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan baru ini. Nilai-nilai yang dijunjung bangsa kita ini akan diukur dari tindakan kita dalam hal ini, tidak hanya dengan kata-kata yang tertuang dalam hukum dan yang diutarakan oleh para pemimpin Timor-Leste.

Selain itu, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor-Leste telah berkomitmen untuk menjunjung, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia dan standar-standar hukum humaniter. Ini mencakup prinsip untuk memastikan tindakan pemulihan dan reparasi yang layak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Prinsip-prinsip dan Panduan PBB tentang Hak untuk Pemulihan dan Reparasi bagi para Korban Pelanggaran Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional (UN Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law).

Konteks Timor-Leste

Berdasarkan penyelidikannya, Komisi menemukan bahwa semua pihak dalam konflik bertanggung jawab dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Selama Audiensi Publik Nasional yang diadakan Komisi menyangkut Konflik Politik Internal, para pemimpin partai politik secara berani dan jujur bersaksi tentang kekerasan selama periode konflik bersenjata internal, mengakui tanggung jawab kelembagaan terhadap sejumlah kejahatan di masa lalu dan komitmen mereka untuk membayar kerugian yang diakibatkan kepada korban dan keluarga mereka.¹ Komitmen ini tecermin dalam Konstitusi Timor-Leste yang mewajibkan Negara menyediakan “perlindungan istimewa bagi orang yang menjadi cacat akibat perang, anak yatim piatu, dan orang tanggungan lain”.² Berdasarkan ini, Negara Timor-Leste mempunyai kewajiban moral dan konstitusional untuk menjamin bahwa para korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu menerima tindakan-tindakan reparasi.

Namun, proporsi tertinggi dari tanggung jawab kelembagaan atas pelanggaran hak asasi manusia terletak di pundak Negara Indonesia, kekuatan pendudukan yang agen-agensya melakukan sebagian besar pelanggaran tersebut. Indonesia mempunyai tanggung jawab moral dan hukum untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan dan agen-agen negaranya.

Belajar dari pengalaman pemulihan terhadap pelanggaran masa lalu pada bangsa lain, perjuangan untuk memperoleh pemulihan dari sebuah bangsa yang menginvasi adalah sesuatu yang akan memakan waktu. Selama itu, banyak korban tidak dapat lagi menunggu. Timor-Leste harus melangkah dalam kekosongan ini. Masyarakat internasional, yang memalingkan wajah ketika kekejaman-kekejaman terjadi, juga menanggung sebagian dari tanggung jawab ini.

12.4. Kontribusi Komisi

*Tidak seorangpun peduli tentang apa yang terjadi pada diri saya.
Saya sendirian.*³

Sebagai sebuah mekanisme keadilan transisional, Komisi telah menjadikan pengalaman dan hak para korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu sebagai fokus utamanya. Dalam melaksanakan mandatnya, Komisi meletakkan para korban pada pusat tujuan jangka panjangnya yaitu pembangunan kembali secara sosial (social rebuilding) dan rekonsiliasi.

Komisi mendengarkan ribuan korban dan menanyakan kepada mereka apa yang diperlukan untuk membantu mereka dalam transformasi ini. Hal ini dilakukan

.....
^{*} Kesaksian aktor-aktor kunci sejarah dan wakil-wakil dan anggota lima partai politik lama, pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76 yang diadakan antara 15 dan 18 Desember 2003, direkam dalam Arsip video CAVR. Komisi juga menerbitkan sebuah buku tentang audiensi ini dengan judul: Konflik Politik Internal 1974-76, Audiensi Publik Nasional CAVR, 15-18 Desember 2003.

selama acara-acara audiensi publik di tingkat nasional, subdistrik, dan desa dan pada lokakarya-lokakarya pemulihan yang dilakukan bersama dengan para korban pelanggaran hak asasi manusia dari semua distrik.

Sebuah bagian khusus dalam badan eksekutif Komisi didirikan untuk mendukung para korban yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Komisi. Tim ini membantu menerapkan suatu program reparasi mendesak untuk membantu para korban yang rentan dengan berbagai keperluan medis yang mendesak dan kebutuhan lainnya. Program ini mengidentifikasi 712 orang korban dengan kebutuhan mendesak yang kemudian dibantu mengakses layanan, diberikan USD200 per orang, dan dalam beberapa kasus, dibantu ikutserta dalam lokakarya pemulihan dan acara audiensi publik yang diadakan oleh Komisi. Komisi, bersama dengan LSM, juga mengembangkan sejumlah proyek perintis tentang langkah-langkah kolektif untuk reparasi yang mendesak di masyarakat yang paling terkena dampak (lihat Bagian 10: Acolhimento dan dukungan bagi korban).

Dalam segala aspek kegiatannya, Komisi berupaya agar kegiatannya mempunyai efek yang reparatif namun kebutuhan akan reparasi yang ditargetkan jauh melebihi kapasitas Komisi dalam waktu yang tersedia. Korban perorangan dan masyarakat secara jelas dan berulang kali mengutarakan kepada Komisi perlunya diadakan kerja dan pemulihan yang berkelanjutan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia.

12.5. Rekonsiliasi

Komisi percaya bahwa rekonsiliasi yang abadi tidak dapat dicapai tanpa menetapkan kebenaran, berupaya menuju keadilan, dan memberikan reparasi kepada para korban. Reparasi diperlukan untuk memulihkan kembali martabat korban dan memperbaiki hubungan yang rusak dalam masyarakat kita. Dalam budaya Timor-Leste, adat kasu sala—sebuah proses mediasi tradisional yang menetapkan siapa yang telah melakukan kesalahan kepada siapa dan ganti rugi apa yang harus diberikan pada pihak yang dirugikan—menciptakan landasan bagi rekonsiliasi masyarakat dan pembangunan perdamaian. Sama halnya, mengakui penderitaan korban melalui reparasi adalah tumpuan bagi rekonsiliasi abadi di suatu bangsa yang telah mengalami kekerasan selama lebih daripada dua dasawarsa.

12.6. Prinsip-prinsip panduan untuk sebuah program reparasi di Timor-Leste

Prinsip-prinsip berikut ini akan membantu berkembangnya program reparasi yang efektif untuk para korban pelanggaran hak asasi manusia yang paling rentan di Timor-Leste:

Kelayakan

Sebagai sebuah bangsa baru pada tahap-tahap awal pembangunan, Timor-Leste menghadapi berbagai kebutuhan mendesak. Untuk menjadi layak dalam konteks ini, program reparasi harus selektif dan memusatkan pada kebutuhan paling mendesak dari mereka yang paling rentan, dan bila mungkin, menyediakan tanggapan secara kolektif yang lebih berharga secara efektif dan berdayacipta.

Akses

Perhatian harus diambil untuk memastikan bahwa program yang diselenggarakan dapat diakses oleh para korban yang dirugikan bukan hanya karena konsekuensi dari pengalaman mereka, tapi karena keterkucilan, kurangnya informasi dan sarana angkutan, terutama bagi mereka di desa-desa terpencil.

Pemberdayaan

Program ini hendaknya memberdayakan mereka yang telah menderita pelanggaran hak asasi manusia berat agar mereka dapat mengambilalih kendali hidup mereka masing-masing dan membebaskan diri mereka dari kendala-kendala praktis maupun dari beban psikologis dan emosional sebagai korban. Pemberian layanan rehabilitasi dan langkah-langkah reparasi lainnya sebaiknya menggunakan pendekatan yang berpusatkan pada korban dan pemberdayaan berbasis komunitas.

Gender

Program ini harus mempertimbangkan perbedaan gender karena konflik di Timor-Leste mempunyai dampak yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan bukan saja mengalami jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berbeda selama konflik, tapi juga menghadapi kendala yang berbeda dalam mengurangi dampak pelanggaran tersebut. Jumlah laki-laki yang menjadi sasaran sebagai korban penahanan, penyiksaan, pembunuhan, dan penghilangan lebih besar daripada perempuan. Namun, apabila perempuan menjadi korban penahanan, penyiksaan, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya, mereka lebih menderita akibat kekerasan seksual dan juga menghadapi diskriminasi yang berkelanjutan sebagai korban. Perempuan juga menderita ketika suami, anak laki-laki, ayah, atau anggota keluarga lainnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Mereka menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga mereka, bertanggung jawab atas anggota keluarga yang sakit dan terluka, dan harus bekerja untuk menafkahi anak-anak dan anggota keluarga yang lain apabila pencari nafkah lain dalam keluarga ditahan, dilenyapkan, dibunuh, atau dibuntungkan. Mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual apabila 'pelindung' keluarga tidak berada di tempat. Sekurang-kurangnya, 50% dari sumberdaya program ini harus ditujukan pada perempuan.

Pengutamakan berdasarkan kebutuhan

Program harus diarahkan pada mereka yang paling membutuhkan dukungan akibat pelanggaran yang terjadi di masa lalu. Tidaklah mungkin dibentuk satu program

reparasi tunggal untuk menjawab segala kebutuhan dari mereka yang menderita selama konflik di Timor-Leste dan program ini tidak berniat menggantikan program pembangunan nasional jangka panjang yang merupakan tujuan utama negara Timor-Leste.

12.7. Program reparasi

Maksud utama skema reparasi ini adalah untuk membantu para korban pelanggaran berat hak asasi manusia yang rentan, dalam cakupan mandat Komisi, dengan memperbaiki sebisa mungkin kerugian hidup mereka yang disebabkan oleh pelanggaran, melalui pemberian layanan sosial dan langkah-langkah simbolis dan kolektif.

Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi korban perlu mencakup perawatan medis dan psikososial. Bilamana hal ini telah disediakan bagi masyarakat umum oleh Pemerintah dan masyarakat sipil, program ini hendaknya mendukung korban untuk mengakses layanan-layanan tersebut, memberikan sumberdaya tambahan bagi badan-badan yang menyediakan layanan agar dapat mencapai penerima program, dan memastikan pemberian layanan yang berkualitas melalui pengawasan dan pemberian umpan balik kepada penyedia layanan.

Langkah-langkah kolektif

Program ini hendaknya juga memastikan bahwa rehabilitasi terjadi dalam konteks masyarakat. Ini berarti bahwa langkah-langkah kolektif dikembangkan untuk memastikan bahwa rehabilitasi korban pelanggaran hak asasi manusia berlangsung dalam konteks dan bersama-sama dengan komunitas mereka. Sebuah mekanisme khusus perlu dikembangkan sehingga komunitas atau kelompok-kelompok korban dapat mengajukan permohonan akan bantuan semacam itu. Langkah-langkah ini harus ditetapkan atas konsultasi dengan para korban dan dapat berupa pengakuan simbolis, seperti dipaparkan di bawah ini, dan/atau dukungan bahan-bahan untuk aktivitas atau hal yang ditentukan bersama oleh para korban.

Langkah-langkah simbolis

Langkah-langkah simbolis yang dikembangkan dalam konsultasi dengan para korban dapat termasuk menciptakan tanda peringatan, upacara peringatan, penggalan kembali dan penguburan kembali para korban, atau menandai dan mendirikan tanda peringatan di tempat-tempat penguburan massal. Langkah-langkah simbolis untuk menghargai para korban kekejaman masa lalu memperkuat komitmen sosial untuk menentang terulangnya tindakan-tindakan seperti itu, dan juga bersifat mendidik dan memajukan rekonsiliasi.

12.8 Tujuan-tujuan

- Mengidentifikasi korban pelanggaran hak asasi manusia yang paling rentan, yang terjadi selama masa mandat Komisi dan mendukung rehabilitasi terhadap mereka.
- Memfasilitasi rehabilitasi komunitas atau kelompok-kelompok korban yang paling terkena dampak pelanggaran hak asasi manusia selama masa mandat Komisi.
- Membantu meningkatkan pengakuan dan penghormatan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dan melestarikan ingatan akan kejahatan dan penderitaan di masa lalu untuk mencegah terulangnya tindakan-tindakan seperti itu.

12.9. Kelompok-kelompok target

Menurut Mandat Komisi: “korban berarti seseorang yang secara individu atau sebagai bagian dari suatu kelompok, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau dirusakkan haknya secara mendasar sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian yang menjadi hak hukum Komisi untuk dipertimbangkan, dan termasuk sanak keluarga atau orang-orang yang menjadi tanggungan dari orang yang telah menderita kerugian.” (Regulasi 10/2001, pasal 1.n)

Mengingat prinsip-prinsip kelayakan dan pengutamaan berdasarkan kebutuhan, Komisi merekomendasikan agar program ini berfokus pada pemberian manfaat kepada yang paling rentan di antara mereka yang masih terus menderita akibat dari pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi antara 24 April 1974 dan 25 Oktober 1999, yaitu:

- Korban penyiksaan
- Orang yang cacat mental dan fisik
- Korban kekerasan seksual
- Janda dan ibu yang tak bersuami
- Anak-anak yang terkena dampak konflik
- Masyarakat yang menderita pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar dan berat, dengan korban yang cukup tinggi dari kategori seperti yang disebut di atas.

Definisi-definisi kerja untuk kelompok-kelompok target

Korban siksaan adalah mereka yang ditahan, disiksa, dan masih terus menderita akibat dari siksaan yang mereka alami.

Orang yang cacat akibat pelanggaran berat hak asasi manusia adalah mereka yang cacat secara permanen baik fisik maupun mental, total atau sebagian, karena akibat dari konflik. Contohnya adalah korban yang diamputasi, terkoyak bagian tubuhnya, kehilangan anggota tubuh, menderita luka tembakan; korban dengan peluru atau pecahan amunisi masih di dalam tubuhnya; atau mereka yang mengalami gangguan permanen karena pukulan dan siksaan berat yang mengakibatkan mereka cacat total atau sebagian; atau korban yang mengalami masalah kesehatan mental karena pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban perlakuan seperti perkosaan, perbudakan seksual, kawin paksa atau jenis-jenis kekerasan seksual lainnya; dan anak laki-laki dan laki-laki yang menderita kekerasan seksual.

Janda dan ibu tak bersuami termasuk perempuan yang suaminya dibunuh atau dinyatakan dalam konteks konflik politik dan yang karena itu menjadi pencari nafkah utama untuk keluarganya. Termasuk di sini juga perempuan yang anak-anaknya lahir dari hasil perkosaan atau perbudakan seksual dan yang karena itu menjadi ibu tanpa suami.

Anak-anak yang terkena dampak konflik didefinisikan sebagai:

- anak-anak yang menderita cacat karena pelanggaran berat hak asasi manusia
- anak-anak yang orang tuanya dibunuh atau dihilangkan
- anak-anak yang lahir sebagai akibat dari tindakan kekerasan seksual yang ibunya tak bersuami
- anak-anak yang menderita gangguan psikologis
- anak-anak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan reparasi apabila mereka berusia 18 tahun ke bawah pada 25 Oktober 1999.

Komisi merekomendasikan bahwa program reparasi ini mulai dengan daftar korban-korban yang telah menghadap kepada CAVR, yang diseleksi dan diprioritaskan berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan dalam kebijakan reparasi ini. Sebuah “periode jendela” dua tahun dibuka untuk identifikasi lanjutan pengguna program reparasi yang memenuhi kriteria, untuk ditambahkan pada daftar yang telah diidentifikasi oleh Komisi. Upaya ini dilakukan untuk menjamin keikutsertaan mereka yang paling rentan, yang tidak berkesempatan menghadap Komisi.

12.10. Pendanaan

Negara Indonesia patut menanggung proporsi yang cukup besar dari biaya. Sebagai kekuasaan pendudukan yang melakukan sebagian besar pelanggaran, Indonesia mempunyai tanggung jawab moral dan hukum yang terbesar untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kebijakannya dan para agennya di Timor-Leste.

Negara-negara anggota masyarakat internasional, dan perusahaan-perusahaan bisnis yang mendukung pendudukan ilegal atas Timor-Leste dan dengan demikian secara tidak langsung memperkenankan dilakukannya pelanggaran-pelanggaran, diwajibkan memberikan reparasi kepada para korban berdasarkan pada prinsip tanggung jawab internasional yang diakui dalam hukum kebiasaan internasional tentang kerugian (*customary law of torts*).

Kontribusi dapat juga diberikan oleh agen-agen internasional dan LSM, berdasarkan pada prinsip keadilan sosial.

Timor-Leste diwajibkan oleh Konstitusinya untuk “menjamin adanya perlindungan istimewa bagi orang yang menjadi cacat akibat perang, anak yatim/piatu, dan orang tanggungan lain dari mereka yang mengabdikan nyawanya kepada perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan negara, dan akan melindungi setiap orang yang mengambil bagian dalam perlawanan menentang pendudukan asing” [Pasal 11, Konstitusi Timor-Leste]. Dalam semangat rekonsiliasi, Komisi merekomendasikan agar upaya memelihara para anggota gerakan Resistansi ini diperluas untuk mencakup juga para korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak.

Jika Indonesia terlalu lambat menanggapi, Timor-Leste dan masyarakat internasional patut memberikan kontribusi mereka sementara menekan Indonesia untuk memenuhi kewajibannya. Banyak korban tidak sanggup menunggu lagi.

Komisi dengan ini merekomendasikan bahwa skema reparasi didanai bersama melalui:

- Alokasi tetap (yang dijamin oleh undang-undang) dari anggaran nasional Timor-Leste
- Reparasi oleh Negara Indonesia
- Reparasi oleh perusahaan-perusahaan bisnis Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara, serta perusahaan-perusahaan dan bisnis internasional dan multinasional yang meraih keuntungan dari perang dan mendapat manfaat dari pendudukan Timor-Leste
- Reparasi dari Anggota-anggota Tetap Dewan Keamanan PBB—Cina, Prancis, Rusia, Kerajaan Inggris dan Amerika Serikat
- Kontribusi dari pemerintah-pemerintah yang memberikan bantuan militer, termasuk penjualan senjata dan pelatihan militer, kepada Pemerintah Indonesia selama pendudukan, dan perusahaan-perusahaan bisnis yang mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata kepada Indonesia

Kontribusi dari Pemerintah-pemerintah, lembaga-lembaga internasional, yayasan-yayasan, dan organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk dana-dana khusus untuk korban pelanggaran hak asasi manusia, seperti Dana PBB untuk Korban Penyiksaan.

Komisi merekomendasikan agar didirikan sebuah dana perwalian (trust fund) untuk menerima dan mengelola semua kontribusi dan agar dana ini diaudit secara teratur.

12.11. Rentang waktu

Komisi merekomendasikan agar program ini berjalan selama sebuah periode awal selama lima tahun, dengan kemungkinan untuk diperpanjang. Dianjurkan agar program beasiswa untuk anak-anak diteruskan sampai anak terakhir yang memenuhi syarat mencapai usia 18 tahun pada 2017.

12.12. Metode

Metode pelaksanaan program reparasi harus dikembangkan dengan berkonsultasi dengan korban dan kelompok korban dan akan mengikutsertakan komponen-komponen sebagai berikut:

Dukungan untuk ibu tak bersuami dan beasiswa untuk anak-anak mereka

Program ini akan menyediakan beasiswa untuk anak-anak dari ibu tak bersuami, termasuk korban kekerasan seksual dan janda perang. Beasiswa ini diberikan pada anak-anak mereka yang berusia sekolah hingga mereka mencapai usia 18 tahun. Dalam paket ini termasuk uang sekolah dan biaya lainnya dan akan dikelola oleh badan-badan pemerintah dan/atau Lembaga Nonpemerintah di tingkat distrik. Ibu-ibu tersebut akan diharapkan dapat melakukan perjalanan ke organisasi yang melaksanakan program beasiswa sekali sebulan untuk menerima tunjangan itu, dan pada saat yang sama mereka dapat mengakses berbagai layanan lainnya, seperti konseling, dukungan antarkorban, keterampilan mencari nafkah, dan akses kepada kredit kecil untuk aktivitas mencari nafkah. Kegiatan bulanan ini dapat juga dijadikan saat yang tepat untuk mengakses layanan penting lainnya, seperti pelayanan kesehatan.

Dukungan untuk orang yang cacat, janda, dan korban kekerasan seksual dan penyiksaan

Program ini akan menyediakan layanan sosial bagi para janda, korban kekerasan seksual (yang tidak mempunyai anak-anak berusia sekolah), orang cacat dan korban siksaan, dengan rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit kecil untuk kegiatan mencari nafkah. Program ini akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, LSM-LSM yang mempunyai spesialisasi, dan LSM yang berbasis masyarakat.

Dukungan untuk masyarakat yang sangat terkena dampak

Program ini akan memberikan dukungan pada masyarakat-masyarakat yang sangat terkena dampak yang mengajukan permohonan secara kolektif untuk reparasi. Dalam permohonan, perlu tercantum informasi tentang bagaimana konflik berdampak pada masyarakat dan secara umum, pelanggaran yang dialami, rancangan proyek untuk mengurangi kerugian yang diderita, dan daftar orang-orang yang akan terlibat dalam kegiatan yang direncanakan. Program ini dapat juga digunakan oleh instansi Pemerintah dan/atau LSM untuk kegiatan seperti lokakarya pemulihan dan kegiatan pemulihan lainnya, termasuk terapi kreatif dan kegiatan seperti teater, seni rupa, musik, dan doa. Perimbangan gender dari orang-orang yang terlibat atau yang menerima dukungan ini menjadi salah satu persyaratan layak-tidaknya permohonan tersebut.

Menciptakan tanda-tanda peringatan

Program ini akan mempromosikan peringatan nasional berdasarkan konsultasi dengan korban dan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah. Program peringatan ini perlu mengacu pada kekejaman yang dipaparkan dalam Laporan ini, meski tidak boleh dibatasi pada itu saja. Program peringatan ini dapat termasuk upacara-upacara peringatan, tanggal-tanggal tertentu, monumen-monumen, dan upaya-upaya lain untuk menghargai dan mengenang korban pelanggaran hak asasi manusia di tingkat masyarakat setempat dan di tingkat nasional. Program peringatan ini juga mencakup pengembangan bahan-bahan pelajaran tentang perjuangan bersejarah Timor-Leste untuk menegakkan hak asasi manusia dan pengembangan bacaan, musik, dan seni populer sebagai peringatan, dan—sebagaimana direkomendasikan di bagian lain Laporan ini—pengembangan program pendidikan untuk membina budaya resolusi konflik berdasarkan prinsip non-kekerasan.

Komitmen terhadap tidak muncul kembalinya kekerasan

Sebagai bagian dari sebuah komitmen nasional terhadap tidak terulangnya kekerasan, sebuah program pendidikan khusus untuk mengurangi dampak kekerasan yang berlangsung selama 25 tahun akan dilaksanakan dalam kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan mengakui bahwa lingkaran kekerasan terus meresap dalam masyarakat Timor-Leste, baik di tempat kerja maupun di rumah, program reparasi nasional harus mengembangkan sebuah kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran publik akan hubungan antara perlakuan kejam di masa lalu dengan perilaku kekerasan dewasa ini. Maksud dari program pendidikan ini adalah untuk memudahkan sebuah perubahan dalam praktik penggunaan kekerasan, sebagai cara untuk menengahi konflik, pada semua tahap kehidupan. Demi menghormati para korban kekerasan massal, kita harus menetapkan suatu komitmen yang jelas untuk mengubah warisan masa lalu ini.

12.13. Badan pelaksana

Komisi merekomendasikan didirikannya sebuah badan pelaksana program reparasi nasional yang akan berfungsi selama jangka waktu program. Tugasnya adalah melaksanakan dan mengoordinasi Program Reparasi Nasional dalam kerjasama dengan serangkaian mitra yang terkait. Termasuk dalam mitra-mitra ini adalah badan-badan pemerintah yang menyediakan layanan publik, seperti Kementerian Perburuhan dan Solidaritas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan LSM penyedia layanan dan organisasi gereja yang bekerja pada tingkat nasional dan distrik.

Badan pelaksana ini akan merekrut ‘pekerja sosial’ atau fasilitator akar-rumput pada tingkat distrik, yang akan menerima pelatihan dan bantuan transportasi. Pekerja-pekerja distrik ini akan membantu menghubungkan para korban dengan pelayanan yang dibutuhkan.

Badan pelaksana ini akan mengembangkan dan mendukung program-program inovatif, bersama dengan LSM-LSM untuk mendukung para korban, kelompok korban, dan masyarakat agar mereka dapat menangani kebutuhan dan masalah yang muncul dengan cara yang berkesinambungan dan memberdayakan.

Badan pelaksana ini hendaknya menetapkan dewan penasihat sebagai sebuah badan konsultasi permanen dalam pengembangan dan pelaksanaan programnya. Dalam dewan tersebut hendaknya terwakili para korban dan kelompok-kelompok korban, dan organisasi dan individu yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat dalam melindungi hak-hak korban.

13. Lembaga penerus CAVR

Komisi telah memberikan kontribusi tertentu terhadap proses pembangunan kebangsaan (*nation building*) di Timor-Leste dalam tahun-tahun awal transisi dalam demokrasi baru kita. Transisi ini merupakan sebuah proses yang panjang dan berkelanjutan. Komisi berpendapat bahwa, berdasarkan pada dialog yang diadakan selama tiga tahun dengan masyarakat, banyak aspek dari pekerjaan Komisi yang harus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya nasional untuk membangun sebuah masyarakat yang didasarkan pada pengakuan tentang kebenaran di masa lalu, anti-kekerasan, rekonsiliasi, dan reparasi. Pekerjaan mencatat, menyimpan, dan menyebarkan kebenaran sejarah Timor-Leste, meneruskan kampanye untuk rekonsiliasi yang sejati, dan menciptakan masyarakat yang berlandaskan hak asasi manusia dan kedaulatan hukum, semuanya ini dapat lebih dimungkinkan dengan didirikannya sebuah lembaga yang dapat meneruskan aspek-aspek pekerjaan Komisi.

Komisi merekomendasikan agar:

- 13.1.1. Parlemen Nasional mendukung rekomendasi-rekomendasi dalam Laporan ini, bertanggung jawab terutama dalam mengamati dan mengawasi pelaksanaannya, dan mendelegasikan tugas ini pada Komite Parlemen yang layak.

13.1.2. Parlemen memberikan mandat kepada sebuah organisasi yang layak untuk melakukan konsultasi nasional di bawah naungan Kantor Presiden tentang peran, kerangka acuan, dan kelayakan sebuah lembaga penerus dan, berdasarkan hasil-hasil temuan ini, agar membuat rekomendasi yang akan dipertimbangkan oleh Parlemen Nasional. Isu-isu yang akan dipertimbangkan hendaknya termasuk:

- Penerapan rekomendasi-rekomendasi dalam Laporan ini
- Perlunya rekonsiliasi lebih lanjut di Timor-Leste
- Pelestarian bekas Comarca Balide sebagai tempat bersejarah dan menggunakannya sebagai pusat memorial nasional akan korban dan hak asasi manusia
- Penyimpanan dan penggunaan arsip-arsip CAVR
- Status hukum lembaga penerus tersebut.

Catatan akhir

1. CAVR, Wawancara dengan korban perbudakan seksual di Uatu-Lari, Viqueque, 18 September 2003.
2. Konstitusi RDTL, Pasal 11, 2002.
3. Pernyataan HRVD 6400.



Chega!

Bagian

8.

Tanggung jawab dan
pertanggungjawaban

Bagian 8. Tanggung jawab dan Pertanggungjawaban

2519 | Pendahuluan

- 2519 | Tanggung jawab negara, lembaga, dan pribadi
 - 2520 | Tindak kejahatan dalam hukum internasional
 - 2521 | Kejahatan terhadap kemanusiaan
 - 2521 | Kejahatan perang
 - 2522 | Genosida
- 2523 | Pembunuhan yang sah dan penahanan
- 2523 | Fokus pada tanggung jawab institusional

2524 | Temuan utama

- 2524 | Negara Indonesia dan Pasukan Keamanan Indonesia
 - 2527 | Program pelanggaran sistematis pada 1999
 - 2528 | Temuan utama tentang tanggung jawab Fretilin
 - 2530 | Temuan utama mengenai tanggung jawab partai politik UDT
 - 2531 | Temuan utama mengenai tanggung jawab partai politik Apodeti
 - 2532 | Temuan utama mengenai tanggung jawab partai KOTA dan Tralabhistas

2532 | Metodologi untuk mengidentifikasi tanggung jawab lembaga

- 2536 | Identifikasi pelaku dalam database pelanggaran hak asasi manusia

2537 | Tanggung jawab dan pertanggungjawaban pasukan keamanan Indonesia

- 2537 | Bukti yang mendasari segmen ini
- 2538 | Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Pasukan Keamanan Indonesia
 - 2538 | Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa
 - 2540 | **Teror dan impunitas**
 - 2541 | Pembunuhan di luar hukum yang terkait dengan dengan operasi militer
 - 2541 | **Pembunuhan di luar hukum sebelum invasi skala penuh ke Timor-Leste**
 - 2541 | **Pembunuhan di luar hukum dan eksekusi sewenang-wenang selama operasi**
 - 2543 | **Pembunuhan dan penghilangan secara sistematis dengan sasaran pribadi atau kelompok**

- 2544 | Hukuman kolektif dan proksi terhadap penduduk sipil oleh ABRI/TNI
- 2546 | 1985-1998: iklim impunitas yang berlanjut
- 2546 | 1999
- 2548 | Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan
 - 2548 | **Pendahuluan**
- 2549 | Kasus-kasus penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan ke Komisi, 1974-1999
 - 2550 | **Penahanan sewenang-wenang**
 - 2550 | **Kondisi penahanan**
- 2551 | Penyiksaan dan penganiayaan
 - 2552 | **Bentuk-bentuk penyiksaan**
- 2554 | Perkosaan, perbudakan seksual dan pelanggaran seksual lainnya
 - 2555 | **Pelanggaran seksual 1974-1999**
 - 2556 | **Kekerasan seksual di dalam instalasi militer Indonesia**
 - 2557 | **Perkosaan perempuan yang menyerah atau ditangkap**
- 2558 | Perbudakan seksual
 - 2558 | **Impunitas bagi pelaku perkosaan, penyiksaan seksual dan perbudakan seksual**
- 2560 | Tanggung jawab atas kelaparan dan pemindahan selama dekade 1970-an dan 1980-an
 - 2560 | **Pendahuluan**
 - 2560 | **Tanggungjawab atas pemindahan massal penduduk sipil**
 - 2562 | **Tanggungjawab atas kelaparan dan kematian dengan tidak menelantarkan**
 - 2565 | **Kesimpulan**
- 2567 | Pengadilan yang tidak adil
 - 2568 | **Anggota angkatan bersenjata Indonesia**
 - 2568 | **Anggota polisi Indonesia**
 - 2569 | **Jaksa penuntut**
 - 2569 | **Tim pembela yang ditunjuk pengadilan**
 - 2570 | **Hakim yang menangani kasus di pengadilan**
- 2570 | Pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak
 - 2571 | **Penahanan anak-anak secara sewenang-wenang**
 - 2572 | **Pembunuhan anak-anak**
 - 2572 | **Pelanggaran seksual terhadap korban anak**
 - 2573 | **Perekrutan paksa anak-anak untuk bertugas di militer**
 - 2574 | **Pemindahan anak-anak Timor secara paksa ke Indonesia**
- 2575 | Tanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan selama konflik
 - 2575 | **Serangan terhadap penduduk sipil dan serangan membabitua**
 - 2576 | **Penghancuran harta-benda milik sipil**

- 2576 | **Perlakuan buruk terhadap petempur musuh**
- 2576 | **Cara perang yang tidak sah**
- 2576 | **Perekrutan paksa**
- 2577 | Tanggung jawab atas pelanggaran hak ekonomi dan sosial rakyat Timor
 - 2577 | **Pendahuluan**
 - 2578 | **Hak atas sumberdaya alam**
 - 2578 | **Hak atas makanan yang mencukupi**
 - 2579 | **Perumahan dan tanah**
 - 2579 | **Kesehatan dan pendidikan**
- 2580 | Tanggung jawab pribadi atas pelanggaran berskala luas dan sistematis
- 2580 | Pertanggungjawaban tingkat tinggi
 - 2582 | Skala pelanggaran
 - 2582 | Pola pelanggaran
 - 2582 | Strategi
 - 2583 | Norma dan budaya kelembagaan
 - 2583 | Ada hubungan atasan-bawahan
 - 2584 | Atasan “mengetahui atau punya alasan untuk mengetahui” bahwa suatu kejahatan akan atau sudah dilakukan
 - 2584 | Pelaku gagal untuk mengambil “tindakan yang diperlukan dan memadai untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut atau menghukum para pelakunya”
 - 2585 | Pelanggaran hukum internasional oleh pasukan keamanan Indonesia
 - 2585 | **Pembunuhan dan penghilangan**
 - 2586 | **Penahanan**
 - 2587 | **Penyiksaan dan penganiayaan**
 - 2588 | **Pelanggaran seksual**
 - 2589 | **Pengadilan yang tidak adil**
 - 2590 | **Pelanggaran terhadap anak**
 - 2592 | **Pemindahan dan kelaparan**
 - 2594 | **Pelanggaran hukum perang**
 - 2595 | **Hak ekonomi dan sosial**
- 2596 | Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai politik Timor
 - 2599 | Tanggung jawab dan pertanggungjawaban Fretilin/Falintil
 - 2599 | Pembunuhan di luar hukum
 - 2600 | Pelanggaran yang dilakukan pada 1975
 - 2600 | **Penahanan dan penyiksaan**
 - 2601 | **Eksekusi sewenang-wenang**
 - 2604 | 1976-1999
 - 2604 | **Penahanan dan penyiksaan**
 - 2605 | **Eksekusi sewenang-wenang**

2607 | 1980-1999

2609 | **Pemindahan paksa dan kelaparan**

2610 | 1999

2610 | Pelanggaran prinsip hukum internasional oleh Fretilin/Falintil

2610 | **Konflik internal bersenjata**

2611 | **Konflik bersenjata internasional 1976-1999**

2612 | **Tanggungjawab pemimpin dan anggota Fretili/Falintil**

2613 | Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai politik UDT

2614 | Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penganiayaan

2615 | **Pembunuhan di luar hukum**

2616 | **Insiden pelanggaran berat**

2618 | **Tanggungjawab dan Pertanggungjawaban personel UDT**

2619 | Pelanggaran prinsip hukum internasional oleh wakil-wakil partai UDT

2620 | Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai Apodeti

2621 | Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai Trabalhista dan KOTA

..... 2622 | Tanggungjawab negara

2622 | Tanggung jawab negara Indonesia

2622 | Pelanggaran hak atas penentuan nasib sendiri

2623 | Tanggung jawab negara atas pelanggaran yang dilakukan anggota pasukan keamanan Indonesia dan petugas pemerintah

2625 | Tanggung jawab negara Portugal

2625 | Konteks sejarah pelanggaran

2627 | Tanggung jawab negara Australia

2629 | Tanggung jawab Amerika Serikat

2630 | Tanggung jawab PBB

..... 2632 | Lampiran 1: Tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan pada 1999

2632 | Pendahuluan

2632 | Bukti yang dipertimbangkan

2635 | Tanggung jawab Indonesia untuk menjaga keamanan dan melindungi penduduk sipil

2635 | **Pelaku pelanggaran**

2636 | Tanggung jawab TNI atas pelanggaran

2636 | Anggota TNI sebagai pelaku pelanggaran

- 2638 | Tanggung jawab TNI atas tindakan kelompok milisi
 - 2638 | Peran TNI dalam membentuk dan mendukung milisi
 - 2640 | Pengakuan TNI atas milisi
 - 2641 | Pengakuan milisi sebagai bagian dari struktur resmi
 - 2642 | Partisipasi personel TNI dalam kelompok
 - 2643 | Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI bersama kelompok milisi
 - 2644 | TNI mengarahkan tindakan milisi
 - 2644 | TNI mempersenjatai milisi
 - 2645 | TNI melatih milisi
 - 2646 | Penggunaan secara resmi instalasi TNI oleh kelompok milisi
 - 2647 | Penyediaan dukungan dana dan material oleh TNI dan lembaga lain
 - 2647 | Kemampuan TNI mengontrol milisi dan tingkat kekerasan yang dilakukan
 - 2648 | Tidak bertindaknya TNI untuk mencegah kekerasan milisi
- 2650 | Pengetahuan, ancaman dan peringatan TNI sebelum kekerasan massal September 1999
- 2651 | Tidak bertindaknya TNI untuk menghukum pelaku/penghargaan lembaga kepada mereka yang terlibat
- 2652 | Peran anggota polisi Indonesia
- 2652 | Kerjasama dan partisipasi pejabat pemerintah Indonesia di tingkat lokal maupun pusat
 - 2654 | Tanggung jawab komando dalam TNI
 - 2655 | Peran penting Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim
- 2656 | Temuan dan kesimpulan
 - 2657 | Kesimpulan
- 2658 | Lampiran 2: Tanggung jawab komando
- 2681 | Lampiran 3: Perorangan dengan komando tingkat tinggi
- 2687 | Lampiran 4: Karier para perwira Indonesia yang bertugas di Timor-Leste

Daftar tabel:

- 2534** | **Tabel 1** : Tanggung jawab pelaku atas pelanggaran yang dilaporkan ke CAVR: 1974-1999
- 2535** | **Tabel 2** : Perincian tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia atas pelanggaran yang dilaporkan kepada CAVR: 1974-1999
- 2538** | **Tabel 3** : Semua pelanggaran yang dilaporkan, 1974-1999
- 2538** | **Tabel 4** : Kasus pembunuhan di luar hukum yang dilaporkan, 1974-1999
- 2539** | **Tabel 5** : Perincian kelompok pelaku: Pembunuhan di luar hukum, 1974-1999
- 2539** | **Tabel 6** : Penghilangan paksa, 1974-1999
- 2539** | **Tabel 7** : Perincian kelompok pelaku: Penghilangan paksa, 1974-1999
- 2549** | **Tabel 8** : Penahanan, 1974-1999
- 2549** | **Tabel 9** : Perincian kelompok pelaku: Penahanan, 1974-1999
- 2549** | **Tabel 10** : Penyiksaan dan penganiayaan, 1974-1999
- 2550** | **Tabel 11** : Perincian kelompok pelaku: Penyiksaan dan penganiayaan, 1974-1999
- 2555** | **Tabel 12** : Pelanggaran seksual, 1974-1999
- 2556** | **Tabel 13** : Perincian kelompok pelaku: Pelanggaran seksual, 1974-1999
- 2600** | **Tabel 14** : Tanggung jawab Fretilin/Falintil atas pembunuhan tidak sah dan penghilangan paksa (kasus yang dilaporkan kepada CAVR)
- 2633** | **Tabel 15** : Pelanggaran oleh kelompok pelaku utama yang dilaporkan, 1999
- 2634** | **Tabel 16** : Perincian tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia, menurut pelanggaran yang dilaporkan, 1999

Daftar tabel Lampiran 2:

- 2658** | **Tabel 1:** Tanggung jawab komando terhadap keterlibatan institusi dalam pelanggaran hak asasi manusia, Timor-Leste 1974 – 1999
- 2660** | **Tabel 2:** Para komandan Kodam XVI/Udayana (1974 - 79)/Kodim IX Udayana
- 2661** | **Tabel 3:** Komandan Korem yang diketahui
- 2663** | **Tabel 4:** Perincian pelanggaran Kodim menurut jenis pelanggaran
- 2663** | **Tabel 5:** Komandan Kodim 1627 Dili yang diketahui
- 2664** | **Tabel 6:** Para komandan Kodim 1631 Manatuto yang diketahui
- 2665** | **Tabel 7:** Para komandan Kodim 1632 Aileu yang diketahui
- 2665** | **Tabel 8:** Komandan Kodim 1633 Ainaro yang diketahui
- 2666** | **Tabel 9:** Komandan Kodim 1634 Manufahi yang diketahui
- 2667** | **Tabel 10:** Komandan Kodim 1637 Ermera yang diketahui
- 2668** | **Tabel 11:** Komandan Kodim 1638 Liquiçá yang diketahui
- 2669** | **Tabel 12:** Komandan Batalion 744 yang diketahui
- 2670** | **Tabel 13:** Komandan Batalion 745 yang diketahui
- 2672** | **Tabel 14:** Komandan Batalion Infanteri 315 yang diketahui
- 2672** | **Tabel 15:** Komandan Batalion Infanteri 321 yang diketahui
- 2672** | **Tabel 16:** Komandan Batalion Infanteri 403 yang diketahui
- 2673** | **Tabel 17:** Komandan Batalion Infanteri 512 yang diketahui
- 2675** | **Tabel 18:** Komandan Kopassus/Unit Nanggala yang diketahui
- 2677** | **Tabel 19:** Komandan Rajawali yang diketahui
- 2678** | **Tabel 20:** Komandan Polres yang diketahui

Tanggung jawab dan Pertanggungjawaban

Pendahuluan

Tanggung jawab negara, lembaga, dan pribadi*

Regulasi 10/2001 memberi Komisi mandat yang mencakup kewajiban untuk menyelidiki latar belakang, penyebab, dan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor-Leste dari 25 April 1974 sampai 25 Oktober 1999.[†] Dalam kerangka ini Komisi khususnya diberi tugas untuk menyelidiki dan membuat temuan mengenai orang, lembaga, dan organisasi yang terlibat dalam pelanggaran, dan apakah pelanggaran tersebut merupakan hasil rencana atau kebijakan yang sengaja dilakukan oleh negara, organisasi politik, kelompok milisi, gerakan pembebasan, atau kelompok atau pribadi lain.[‡]

Karena bukan lembaga peradilan, Komisi tidak membuat temuan mengenai hukum. Namun demikian, temuannya mengenai tanggung jawab pelanggaran hak asasi manusia didasarkan pada prinsip hukum kebiasaan internasional.[‡] Komisi juga telah mempertimbangkan tanggung jawab politik, moral, dan sejarah.

Sesuai mandatnya Komisi membuat temuan mengenai tanggung jawab dalam kaitannya dengan negara, lembaga, organisasi, dan pribadi.

Negara bertanggung jawab secara hukum dan moral atas perilaku lembaganya dan aparatnya. Ini tidak hanya mencakup para pejabat dan pegawai negara, tetapi juga

* Penjelasan lengkap mengenai hukum yang mengatur pertanggungjawaban negara, lembaga, dan pribadi diberikan di Bagian 2: Mandat Komisi.

† Lihat Bagian 2: Mandat Komisi, untuk penjelasan lebih lengkap mengenai mandat Komisi.

‡ Mandat Komisi mengharuskan Komisi memakai standar hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum pidana domestik dalam menentukan apa yang disebut tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

pribadi-pribadi yang tindakannya diatur oleh negara. Sebuah negara memikul tanggung jawab menurut hukum internasional apabila tindakannya (melalui lembaga atau aparatnya) melanggar kewajiban internasional yang mengikat negara tersebut menurut hukum atau perjanjian internasional. Ini bisa terjadi dengan secara positif melakukan suatu tindakan. Ini juga bisa terjadi bila negara tidak mencegah pelanggaran atau menyelidiki dan mengadili orang yang bertanggung jawab.

Komisi menganggap bahwa organisasi dan lembaga, termasuk partai politik, bertanggung jawab secara kelembagaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau aparatnya ketika mereka bertindak atas nama organisasi, lembaga, atau partai.

Pribadi dianggap bertanggung jawab bila, menurut pertimbangan Komisi, ada cukup bukti yang menengarai bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang diatur oleh hukum kebiasaan internasional atau hukum domestik yang berlaku saat terjadinya pelanggaran.

Pribadi bisa dimintai pertanggungjawaban dalam salah satu dari tiga hal berikut. Yang pertama ialah bila pribadi tersebut secara sengaja melakukan, merencanakan, memerintahkan, membantu, atau mendukung perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan tindakan kejahatan. Kedua, pribadi bertanggung jawab atas keikutsertaan dalam rencana bersama atau konspirasi untuk memudahkan terjadinya tindak kejahatan. Ketiga, pribadi bisa dianggap bertanggung jawab sesuai prinsip tanggung jawab komando.

Menurut hukum internasional seseorang yang dalam jabatannya sebagai atasan (baik secara hukum maupun *de facto*) dan yang mempunyai wewenang atas bawahannya² mempunyai tanggung jawab komando bila suatu tindak kejahatan dilakukan oleh bawahan dan atasan mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan kejahatan tersebut tetapi tidak melakukan apapun untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan tersebut atau menghukum pelaku.³

Tindak kejahatan dalam hukum internasional

Meski bukan pengadilan, Komisi membuat temuan bilamana Komisi percaya bahwa tindak kejahatan internasional tertentu telah terjadi dan Komisi telah mengidentifikasi orang yang diyakini bertanggung jawab atas tindak kejahatan tersebut. Meskipun banyak tindak kejahatan internasional memungkinkan tuntutan hukum hanya terhadap pribadi pelaku yang melakukan tindakan kejahatan tersebut, Komisi telah membuat temuan yang lebih umum tentang tanggung jawab lembaga yang diwakili oleh individu pelaku tersebut, termasuk tanggung jawab negara atas tindakan aparatnya. Dalam membuat temuan ini Komisi memakai standar hukum yang dijabarkan dalam Bagian 2: Mandat Komisi. Standar Hukum ini dijelaskan secara singkat berikut ini.

Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi apabila tindakan tertentu yang dilarang, dilakukan sebagai bagian dari serangan skala luas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Penduduk sipil yang dimaksud adalah kelompok sipil apapun. Kelompok ini termasuk, misalnya, kelompok yang mempunyai kaitan ideologi, politik, atau budaya, atau terkait secara gender,⁴ termasuk kelompok sipil yang menyuarakan kebebasan atau mendukung resistansi terhadap pendudukan. Tindakan yang dilarang termasuk: pembunuhan; pembinasan (termasuk dengan tidak memberikan makanan); perbudakan; deportasi atau pemindahan paksa penduduk; kerja paksa; pemenjaraan; penyiksaan; perkosaan; memberikan hukuman karena alasan politik, ras, atau agama; penghilangan paksa; dan tindakan tidak manusiawi lainnya “yang memiliki sifat serupa yang secara sengaja menimbulkan penderitaan yang mendalam atau luka berat baik fisik maupun mental atau kesehatan fisik”. Tindakan yang dilarang ini dilakukan sebagai bagian dari serangan skala luas atau sistematis terhadap penduduk sipil. ‘Skala luas’ artinya skala besar baik dalam hal serangannya maupun jumlah penduduk yang menjadi sasaran, sementara kata ‘sistematis’ artinya tindakan yang sifatnya terorganisasi dan tidak mungkin terjadi secara acak.⁷

Kejahatan perang

Dua kategori kejahatan perang berlaku dalam konteks konflik bersenjata internasional, seperti konflik antara pasukan bersenjata Indonesia dan gerakan pembebasan nasional Timor-Leste antara 1975 dan 1999.[†] Kategori pertama adalah ‘pelanggaran berat’ Konvensi Jenewa.[‡] Suatu ‘pelanggaran berat’ terjadi apabila tindakan kejahatan tertentu dilakukan terhadap orang yang lemah, misalnya orang yang terluka, orang yang sakit, tawanan perang, dan penduduk sipil. Tindakan-tindakan tersebut termasuk:

- Pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, secara sengaja menyebabkan penderitaan yang mendalam atau luka parah baik fisik maupun kesehatan

.....
^{*} *Kunarac Appeal Judgement*, paragraf 94. Menurut ICTR sebuah serangan dianggap ‘berskala luas’ apabila serangan itu berupa tindakan yang sering dilakukan dan berskala besar, yang dilakukan secara kolektif secara sungguh-sungguh dan ditujukan kepada korban dalam jumlah banyak. [Prosecutor v Akayesu, Judgment, No. ICTR-96-4-T, paragraf 580, 2 Sept. 1998]. ICTR mendefinisikan kata ‘sistematis’ sebagai “tindakan terorganisasi, yang mengikuti pola tetap, yang berasal dari kebijakan umum dan melibatkan sumber daya umum dan swasta yang besar...[H]arus ada unsur rencana atau kebijakan yang sudah ditetapkan.” [Prosecutor v Musema, Judgment, No. ICTR-96-13-T, paragraf 204, 27 Jan. 2000]. Rencana atau kebijakan tersebut tidak harus dinyatakan secara formal; Rencana atau kebijakan tersebut bisa dirunut dari kenyataan di lapangan, termasuk “skala tindakan kekerasan yang dilakukan.” [Prosecutor v Blaskic, Judgment, No. IT-95-14-T, paragraf 204, 3 Maret 2000].

[†] Untuk penjelasan lengkap mengenai dasar hukum temuan Komisi bahwa konflik antara pasukan Indonesia dan Fretilin/Falintil adalah sebuah ‘konflik bersenjata internasional’ lihat Bagian 2: Mandat Komisi.

[‡] Baik Indonesia dan Portugal meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I.

- Penghancuran besar-besaran dan perampasan harta benda yang tidak terkait dengan keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan semena-mena
- Memaksa tawanan perang atau penduduk sipil bertugas di pasukan musuh
- Secara sengaja menolak memberikan hak atas pengadilan yang tidak berat sebelah kepada tawanan perang atau penduduk sipil
- Deportasi atau pemindahan yang tidak sah atau pembatasan kebebasan penduduk sipil secara tidak sah; dan memperlakukan penduduk sipil sebagai sandera

Kategori kedua terdiri atas pelanggaran hukum dan kebiasaan perang. Hal ini termasuk pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, atau deportasi penduduk sipil; pembunuhan atau penganiayaan terhadap tawanan perang; perampokan harta benda milik pribadi maupun milik negara; dan penghancuran semena-mena kota atau desa, atau perusakan yang tidak terkait dengan keperluan militer.

Dalam sebuah konflik bersenjata internal, seperti antara pengikut Fretilin dan UDT pada 1975, kejahatan perang terdiri atas pelanggaran yang paling berat seperti yang tertuang dalam Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa atau dalam hukum dan kebiasaan perang.⁵ Pelanggaran berat Pasal Umum 3 termasuk tindak kejahatan terhadap orang yang tidak ikut terlibat dalam perseteruan, seperti anggota pasukan bersenjata yang telah meletakkan senjata atau yang sakit, terluka, atau dalam tahanan. Tindak kejahatan demikian meliputi pembunuhan, kekerasan terhadap orang, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyiksaan; melakukan tindakan terkait dengan martabat orang, khususnya perlakuan yang mempermalukan atau merendahkan; menjadikan sandera; dan memutuskan hukuman dan melaksanakan eksekusi tanpa proses hukum yang layak.

Genosida

Genosida didefinisikan sebagai tindakan-tindakan berikut yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan, secara menyeluruh atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama seperti dengan melakukan:

- Membunuh anggota kelompok
- Menyebabkan luka parah baik mental maupun fisik kepada anggota kelompok
- Secara sengaja menciptakan kondisi hidup kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kehancuran fisik baik secara menyeluruh maupun sebagian
- Memaksakan tindakan yang menghambat kelahiran dalam kelompok
- Secara paksa memindah anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain

Meskipun banyak kritik yang dilontarkan mengenai definisi ini, termasuk kritik yang menyatakan bahwa definisi ini terlalu sempit, masyarakat dunia hampir secara universal menerima bahwa definisi ini mencerminkan ketentuan hukum kebiasaan.

Definisi hukum tindak kejahatan genosida internasional tidak termasuk tindakan yang diarahkan kepada kelompok-kelompok politik, seperti sebuah gerakan yang mendukung kemerdekaan politik. Persoalan apakah korban serangan pasukan keamanan Indonesia merupakan sebuah kelompok bangsa yang berjuang untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri merupakan persoalan yang membutuhkan pertimbangan teknis hukum tingkat tinggi oleh pengadilan yang mempunyai yurisdiksi mengenai persoalan ini. Komisi tidak menganggap keputusan teknis tingkat tinggi yurisprudensi internasional sebagai bagian dari mandatnya. Karena itu, Komisi telah memutuskan untuk tidak membuat temuan mengenai persoalan apakah tindakan pasukan keamanan Indonesia merupakan tindakan genosida atau tidak. Namun demikian, Komisi telah membuat temuan mengenai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, yang keduanya berlaku dalam kasus-kasus yang sedang dipertimbangkan.

Pembunuhan yang sah dan penahanan

Pembunuhan dan penahanan petempur oleh anggota pasukan musuh tidak dianggap melanggar hukum humaniter internasional apabila pembunuhan tersebut dilakukan dalam batas-batas cara perang yang bisa diterima. Tindakan semacam ini karena itu dimasukkan dalam definisi pelanggaran hak asasi manusia yang dipakai Komisi. Tindakan tersebut tidak dicakup dalam Laporan ini, dan tidak dimasukkan dalam tindakan-tindakan yang didefinisikan sebagai pelanggaran untuk maksud analisa statistik.*

Fokus pada tanggung jawab institusional

Komisi dirancang menjadi bagian dari upaya lebih besar dengan tujuan memenuhi kebutuhan keadilan atas tindak kejahatan di masa lalu dan rekonsiliasi setelah konflik 25 tahun di Timor-Leste. Komisi diciptakan sebagai mekanisme yang melengkapi proses peradilan Kejahatan Berat yang disponsori PBB. Sebelum pembentukan Komisi, Unit Penyelidikan Kejahatan Berat dan Panel Khusus di Pengadilan Distrik Dili lebih dulu dibentuk, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272,[†] dengan mandat menyelidiki dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan berat yang terjadi antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999.[‡] Sesuai prinsip yurisdiksi universal (tidak terbatas waktu dan tempat), Unit Penyelidikan Kejahatan Berat juga diberi wewenang menyelidiki dan mengadili

* Lihat Bagian 2: Mandat Komisi untuk ringkasan mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter yang dipakai Komisi.

† Resolusi Dewan Keamanan 1272 (1999) membentuk UNTAET pada tanggal 25 Oktober 1999, dan memberi mandat untuk “menjalankan wewenang eksekutif dan legislatif, termasuk penegakan keadilan”.

‡ Regulasi UNTAET 2000/16/, *Regulasi tentang Pembentukan Layanan Kejaksaan* (6 Juni 2000); Regulasi UNTAET 2000/15, Bagian 22 (6 Juni 2000) menyatakan bahwa panel hakim yang menangani kasus-kasus ‘Kejahatan Berat’, dan dalam Pengadilan Banding, terdiri atas dua hakim internasional dan satu hakim Timor.

mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida yang terjadi selama periode mandat Komisi, dari April 1974 sampai Oktober 1999.*

Ketimbang mengulang pekerjaan Unit Penyelidikan Kejahatan Berat PBB, yang bertugas menyelidiki kasus per kasus, mandat Komisi mencakup kewajiban menyelidiki pola kekerasan yang lebih luas, termasuk konteks dan latar belakangnya, yang terjadi selama periode 25 tahun konflik. Penyelidikan dan pertimbangan Komisi karena itu terutama diarahkan pada penegakan kebenaran tentang tanggung jawab negara dan lembaga-lembaga lain atas pola pelanggaran yang luas, terutama pelanggaran yang dilakukan sebagai bagian dari rencana atau program terorganisasi.

Temuan utama

Negara Indonesia dan pasukan keamanan Indonesia

Komisi menemukan bahwa:

Invasi militer ke Timor-Leste oleh Indonesia pada 7 Desember 1975 merupakan pelanggaran salah satu prinsip hukum internasional yang paling fundamental dan diterima secara universal—larangan pemakaian kekerasan oleh satu negara terhadap negara lain. Komisi menyatakan bahwa Negara Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran dan konsekuensinya.

Selama periode pendudukan militer yang tidak sah di Timor-Leste anggota pasukan keamanan Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar, luas, dan sistematis terhadap penduduk sipil di wilayah ini. Komisi yakin bahwa pelanggaran ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Bagian tidak terpisahkan dari operasi militer yang dirancang untuk mengalahkan Resistansi terhadap invasi dan pendudukan Indonesia ialah pengakuan secara resmi tindak pelanggaran berat termasuk pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan perkosaan serta perbudakan seksual dalam skala luas dan secara sistematis.

Komisi menemukan bahwa Pemerintah Indonesia dan pasukan keamanan Indonesia terutama bertanggung jawab atas kematian yang disebabkan oleh kelaparan dan sakit di antara 100.000 sampai 180.000 penduduk sipil Timor yang meninggal sebagai akibat langsung invasi dan pendudukan Indonesia. Komisi menerima bukti tidak terbantahkan bahwa selama 1976-1979 pasukan keamanan Indonesia secara sistematis:

* Yurisdiksi universal secara jelas diterima oleh Regulasi UNTAET 2000/15, Bagian 2.

- Tidak membedakan antara penduduk sipil dan sasaran militer dalam melancarkan pengeboman skala besar dari darat, laut, dan udara dan operasi-operasi militer lainnya yang mengakibatkan banyak penduduk sipil Timor harus melarikan diri dari rumah mereka dan setelah itu harus melarikan diri lagi, sering berkali-kali, yang berakibat pada sangat terhambatnya kemampuan mereka bertahan hidup.
- Menghancurkan sumber makanan dengan membakar dan meracuni tanaman pangan serta persediaan pangan, membantai ternak, memaksa puluhan ribu penduduk Timor yang menyerah atau ditangkap pasukan Indonesia untuk menghuni permukiman yang telah ditetapkan di mana mereka tidak bebas pergi.
- Tidak memberi kepada penduduk di permukiman makanan atau obat-obatan yang memadai untuk menjamin hidup mereka, meskipun kebutuhan tersebut bisa diperkirakan sebelumnya karena serangan militer pasukan Indonesia secara nyata berupaya mencapai tujuan yang memang mereka raih kemudian— yaitu penyerahan diri secara massal penduduk yang berada di bawah kontrol Fretilin ke daerah-daerah yang berada di bawah kontrol Indonesia.
- Menolak memberikan kepada penduduk yang disekap di tempat penampungan kebebasan mencari makanan.
- Menolak kehadiran lembaga bantuan internasional yang menawarkan makanan kepada mereka yang berada di permukiman.
- Tetap menjalankan kebijakan-kebijakan di atas, bahkan setelah ribuan penduduk laki-laki, perempuan, dan anak-anak kelaparan sampai meninggal di kamp-kamp dan daerah-daerah tertutup.

Komisi menemukan bahwa satu-satunya kesimpulan logis yang bisa diambil dari tindakan-tindakan ini ialah bahwa pasukan keamanan Indonesia secara sadar memakai kelaparan penduduk sipil Timor sebagai senjata perang, sebagai bagian strategi untuk menghancurkan resistansi terhadap pendudukan militer.

Komisi berkesimpulan bahwa pemaksaan secara sengaja suatu kondisi hidup yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup ribuan penduduk sipil Timor mengarah kepada pembinasaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap penduduk sipil Timor.

Komisi berkesimpulan bahwa selama invasi dan pendudukan, anggota pasukan keamanan Indonesia membunuh ribuan penduduk Timor yang bukan petempur. Eksekusi termasuk eksekusi massal dan pembantaian, pembunuhan tahanan yang ditangkap atau yang menyerah, hukuman kolektif atau terhadap kerabat atas tindakan yang dilakukan orang lain yang lolos dari penangkapan. Hukuman kolektif merupakan komponen utama dan sistematis dalam strategi militer Indonesia yang dirancang untuk mematahkan resistansi terhadap pendudukan militer. Pembunuhan tidak sah ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Komisi berkesimpulan bahwa selama seluruh periode sejak invasi Indonesia pada 1975 sampai kedatangan pasukan penjaga perdamaian internasional pada 1999, anggota pasukan keamanan Indonesia menjalankan program penahanan sewenang-wenang dalam skala luas dan sistematis, yang secara teratur melibatkan penyiksaan ribuan penduduk Timor yang bukan petempur. Praktik semacam ini bersifat sistematis dan disetujui serta didorong oleh aparat keamanan dan pemerintahan sipil di tingkat tertinggi. Penggunaan penyiksaan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Selama periode konflik, anggota pasukan keamanan Indonesia secara sistematis memerkosakan dan memaksakan perbudakan seksual terhadap ribuan perempuan Timor, kadang di dalam kompleks militer, kantor polisi, dan kantor pemerintah. Perkosaan kelompok oleh anggota militer di dalam kompleks militer sering terjadi, demikian juga penyiksaan seksual. Komisi berkesimpulan bahwa perkosaan secara sistematis terhadap perempuan yang kebanyakan masih muda ini, yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Komisi mendasarkan temuannya pada kesaksian langsung dari ratusan korban yang tidak saling mengenal dan dengan berani menceritakan pengalaman mereka meskipun harus berkorban banyak untuk bisa memberikan kesaksian tersebut.

Komisi berkesimpulan bahwa semua kategori utama pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia terhadap orang dewasa juga dilakukan terhadap anak-anak. Anak-anak (di bawah 18 tahun) secara sistematis dibunuh, ditahan, disiksa, diperkosakan, dan dilecehkan dalam skala luas oleh anggota pasukan keamanan Indonesia di dalam kompleks militer dan lokasi-lokasi resmi lainnya.

Komisi berkesimpulan bahwa komandan dan personel ABRI/TNI melakukan pelanggaran yang signifikan dalam kaitannya dengan kewajiban mereka sesuai hukum internasional dengan menggunakan cara perang yang tidak sah dalam kampanye mereka di Timor-Leste. Tindakan yang secara teratur dilakukan yang melanggar Konvensi Jenewa termasuk:

- Menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran dalam serangan militer
- Tidak membedakan antara sasaran sipil dan militer
- Memberikan hukuman kolektif kepada penduduk sipil atas tindakan yang dilakukan anggota pasukan Resistansi
- Membunuh, menyiksa, dan menganiaya penduduk sipil yang menyerah atau ditawan
- Menggunakan senjata yang dilarang termasuk napalm dan senjata kimia
- Perekrutan paksa dalam skala besar, termasuk anak-anak
- Penghancuran secara sengaja sumber makanan penduduk sipil

Komisi berkesimpulan bahwa hakim, penuntut umum, pengacara, polisi, dan intel militer bekerjasama untuk menggelar pengadilan yang tidak benar terhadap ribuan orang Timor setelah penangkapan mereka karena terlibat kegiatan politik prokemerdekaan. Pengadilan ini meliputi penggunaan siksaan secara sistematis untuk mendapatkan pengakuan, pemalsuan bukti, dan manipulasi proses hukum. Mereka yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan pengadilan ini bertanggung jawab atas pemenjaraan yang tidak sah terhadap ratusan pendukung kemerdekaan Timor-Leste.

Komisi berkesimpulan bahwa Negara Indonesia melanggar hak rakyat Timor untuk memanfaatkan dan menikmati keuntungan yang didapat dari sumberdaya mereka sendiri. Hak ini dilanggar dengan berbagai cara termasuk: memperbolehkan pasukan keamanan Indonesia dan mitra usaha mereka menguasai tanaman kopi orang Timor dan membawa sumberdaya dalam jumlah besar, seperti kayu cendana dan jenis kayu lain, ke luar wilayah ini. Indonesia juga melanggar hak rakyat Timor dengan menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Australia untuk mengeksploitasi minyak dan gas alam di Laut Timor.

Program pelanggaran sistematis pada 1999

Komisi berkesimpulan bahwa pejabat senior militer Indonesia, polisi, dan pemerintahan sipil terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar yang ditujukan untuk memengaruhi hasil Jajak Pendapat PBB di Timor-Leste pada 1999. Salah satu cara utama program ini dilaksanakan ialah dengan membentuk kelompok-kelompok milisi Timor dan memperkuat kelompok milisi yang sudah ada.

Komisi berkesimpulan bahwa kelompok-kelompok milisi dibentuk, dilatih, dipersenjatai, didanai, diarahkan, dan dikontrol oleh pasukan keamanan Indonesia. Anggota militer Indonesia bertindak sebagai komandan sejumlah kelompok milisi, pejabat senior memberikan persetujuan kepada milisi, mereka beroperasi dari basis-basis militer Indonesia, dan biasanya melakukan kejahatan di hadapan atau di bawah arahan anggota TNI berseragam.

Program yang dilaksanakan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia menggunakan kekerasan dan teror, termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemukulan, perkosaan, dan penghancuran harta benda dalam upaya memaksa pemilih Timor untuk memilih secara resmi “integrasi” dengan Indonesia. Ketika strategi ini gagal mencapai tujuan, pasukan keamanan dan milisi binaan mereka melakukan tindak kekerasan, dengan sasaran warga dan harta benda, dan secara paksa memindahkan ratusan ribu penduduk Timor ke Timor Barat.

Komisi berkesimpulan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar yang dilakukan sepanjang 1999 bukan merupakan akibat dari konflik antara kelompok orang Timor yang mempunyai pandangan politik berbeda. Pelanggaran ini juga bukan akibat dari “oknum gila” di TNI yang bertindak di luar kontrol atasan mereka. Pelanggaran dilakukan karena mengikuti rencana sistematis yang disetujui, dilakukan, dan dikontrol oleh komandan militer Indonesia sampai tingkat paling atas.

Pelanggaran sistematis yang terjadi pada 1999 dipermudah baik dengan keterlibatan langsung maupun tidak bertindak anggota polisi Indonesia, yang secara sistematis tidak melakukan apa-apa untuk mencegah agar pelanggaran tidak terjadi dan untuk menghukum pelaku yang melakukan pelanggaran.

Anggota pemerintahan sipil setempat di Timor-Leste dan pejabat pemerintah tingkat nasional, termasuk menteri, tahu tentang strategi yang dilaksanakan di lapangan, dan bukannya melakukan langkah untuk menghentikan pelanggaran, tapi mereka justru mendukung secara langsung pelaksanaannya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia sepanjang 1999 termasuk ribuan insiden terpisah yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisi menyatakan bahwa para pemimpin pasukan keamanan Indonesia di tingkat paling atas bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan peran mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu strategi yang di dalamnya pelanggaran hak asasi manusia merupakan bagian tidak terpisahkan, karena mereka tidak mencegah atau menghukum pelaku yang berada di bawah komando mereka, dan karena menciptakan iklim impunitas di mana personel militer didorong melakukan tindakan kejam terhadap penduduk sipil yang diketahui atau ditengarai menjadi pendukung kemerdekaan Timor.

Temuan utama tentang tanggung jawab Fretilin

Komisi berkesimpulan bahwa wakil-wakil Fretilin berhak mengangkat senjata untuk membela diri mereka dan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri sebagai tanggapan atas tindakan wakil-wakil partai UDT selama gerakan bersenjata pada Agustus 1975.

Namun demikian, wakil-wakil Fretilin menanggapi dengan melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap anggota dan pemimpin UDT dan, dalam skala lebih kecil, terhadap anggota serta pemimpin Apodeti, yang samasekali tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Secara khusus, anggota Fretilin bertanggung jawab atas penahanan sewenang-wenang, pemukulan, penyiksaan, penganiayaan, dan eksekusi penduduk sipil yang diketahui atau dicurigai sebagai anggota UDT dan Apodeti. Tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban mereka sesuai Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa, yang berlaku untuk konflik bersenjata internal.

Wakil-wakil Fretilin membunuh tahanan di Aileu (Aileu), Maubisse (Ainaro), dan Same (Manufahi) antara Desember 1975 dan Februari 1976. Komisi berkesimpulan bahwa di samping Fretilin tingkat lokal serta pemimpin dan komandan Falintil di Aileu, Maubisse, dan Same pemimpin dan komandan senior, termasuk anggota Komite Sentral Fretilin, berada di lokasi saat kejadian dan bertanggung jawab atas penyiksaan dan eksekusi tahanan di lokasi-lokasi tersebut pada akhir 1975 dan awal 1976. Meski Komisi memahami bahwa Komite Sentral Fretilin tidak mengambil keputusan resmi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Komisi berkesimpulan bahwa para pemimpin dan komandan senior tersebut tahu

bahwa pelanggaran tersebut terjadi, atau terlibat secara langsung dalam membuat keputusan apa yang harus dilakukan, atau menyaksikan apa yang terjadi.

Komisi berkesimpulan bahwa saat perbedaan mengenai strategi militer dan ideologi muncul dalam tubuh Resistansi selama 1976 dan 1977-78, para pemimpin Fretilin yang termasuk dalam faksi dominan dalam partai serta para pendukung mereka menanggapi perbedaan tersebut dengan cara yang sangat tidak toleran. Tidak adanya toleransi ini terwujud dalam pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk penyiksaan dan penganiayaan para tahanan dan eksekusi para pemimpin dan anggota Fretilin yang tidak setuju dengan pemimpin Fretilin dari faksi dominan. Korban sering diperlakukan dengan cara yang disebutkan di atas setelah dituduh bekerjasama dengan, memata-matai untuk, atau bertindak sebagai agen pasukan keamanan Indonesia. Komisi berkesimpulan bahwa tuduhan-tuduhan ini sering punya motivasi politik, dan bahwa Fretilin/Falintil memberikan hukuman berat kepada para korban yang dituduh melakukan kejahatan di atas, termasuk penahanan dengan jangka waktu tidak terbatas dalam kondisi mengengaskan dan eksekusi, tanpa proses hukum yang memadai atau yang tidak memenuhi standar internasional untuk keadilan.

Para pemimpin Fretilin juga bertanggung jawab atas penahanan ratusan orang di *Renal* dan tempat-tempat penahanan lain yang didirikan oleh Fretilin. *Renal* didirikan untuk “mendidik kembali” orang-orang yang mempunyai pandangan politik berbeda dari para pemimpin, atau orang-orang yang kesetiannya diragukan. Mereka yang ditahan termasuk banyak orang biasa yang tinggal di wilayah yang dikuasai Fretilin yang dipercaya, sering tanpa dasar jelas, berencana menyerah kepada pasukan Indonesia atau melakukan hubungan dengan pasukan Indonesia atau kolaborator Timor mereka. Orang-orang ini juga termasuk mereka yang dituduh melakukan tindak kriminal. Orang-orang ini ditahan dalam kondisi tidak manusiawi, dijadikan sasaran pemukulan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian mereka di tahanan, dan banyak orang dieksekusi.

Komisi berkesimpulan bahwa meskipun Fretilin mengajukan orang-orang yang ditahan selama periode 1976-78 ke proses ‘pengadilan rakyat’, para pemimpin Fretilin di Timor-Leste bertanggung jawab karena menyetujui “proses pengadilan” yang sangat tidak adil yaitu dengan menolak hak tertuduh untuk mengetahui sifat tuduhan yang diajukan kepada mereka sebelum “proses pengadilan” dimulai, untuk dianggap tidak bersalah, dan untuk membantah tuduhan yang diajukan. Sebagai akibat “pengadilan semu” ini, tertuduh sering dijadikan sasaran pelanggaran berat lebih lanjut, termasuk eksekusi.

Persoalan apakah orang-orang seharusnya dicegah atau dibiarkan menyerahkan diri kepada pasukan Indonesia beberapa tahun setelah invasi adalah persoalan rumit, dan pengambilan keputusan tertentu bisa dipahami. Namun demikian, Komisi berkesimpulan bahwa perlakuan kejam, penyiksaan, dan, dalam kasus-kasus tertentu, pembunuhan orang-orang yang ingin menyerahkan diri samasekali tidak bisa dibenarkan. Tanpa melihat benar tidaknya debat mengenai penyerahan diri, para pemimpin Fretilin yang menyetujui dan dalam kasus-kasus tertentu menjalankan

praktik-praktik ini tetap bertanggung jawab atas pelanggaran hak korban yang sangat berat ini, yang samasekali tidak bisa dibenarkan apapun alasannya.

Komisi berkesimpulan bahwa tindakan anggota Fretilin dan orang-orang yang terkait dalam hal penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan penduduk sipil, tahanan, orang yang terluka dan sakit merupakan pelanggaran kewajiban mereka sesuai Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa.

Temuan utama mengenai tanggung jawab partai politik UDT

Komisi berkesimpulan bahwa pada 11 Agustus 1975 para pemimpin partai UDT melancarkan gerakan bersenjata, yang bertujuan mengambil kekuasaan politik di wilayah Timor-Leste. UDT tidak mempunyai wewenang hukum untuk melakukan tindakan ini, dan dengan melakukan hal tersebut melanggar hak rakyat Timor untuk menentukan secara bebas masa depan politik mereka.

Selama gerakan bersenjata, UDT melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala luas terhadap penduduk sipil dan petempur yang tidak terlibat pertempuran, dan khususnya terhadap orang-orang yang dipercaya sebagai pemimpin dan pendukung Fretilin. Ratusan penduduk sipil ditahan secara sewenang-wenang, kebanyakan dari mereka disiksa, dibunuh, atau dianiaya.

Komisi berkesimpulan bahwa tindakan beberapa pemimpin dan anggota partai UDT, dan mereka yang mempunyai hubungan dengan partai, dalam kasus penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan penduduk sipil, tahanan, orang yang terluka dan sakit merupakan pelanggaran kewajiban mereka sesuai Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa.

Komisi berkesimpulan bahwa para pemimpin UDT saat itu bertanggung jawab karena mendorong anggota mereka melakukan aksi bersenjata tanpa membentuk sistem komando dan kontrol yang secara efektif bisa mengatur perilaku anggotanya. Mereka tidak menyiapkan fasilitas yang layak bagi ratusan tahanan yang mereka tahan. Komisi karena itu berkesimpulan bahwa para pemimpin partai UDT saat terjadinya gerakan bersenjata bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota UDT yang bertindak di bawah komando mereka.

Komisi berkesimpulan bahwa para pemimpin lokal UDT yang menyebarkan kebencian dan yang memerintahkan agar korban ditahan, dipukuli, disiksa, atau dibunuh, bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan konsekuensi tindakan mereka. Bentuk penganiayaan yang paling berat yang dilaporkan kepada Komisi terjadi di kantor pusat UDT di Dili, dan di Distrik Ermera dan Liquiçá, yang merupakan basis kuat UDT.

Komisi menyatakan bahwa para pemimpin partai UDT di Distrik Dili, Ermera, dan Liquiçá pada Agustus 1975 bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan pelanggaran berat berskala besar yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak di bawah komando dan kontrol mereka. Pelanggaran ini termasuk memerintahkan atau membiarkan siksaan dan eksekusi kelompok

penduduk sipil yang tidak bersenjata oleh anggota partai yang bertindak di bawah komando mereka.

Komisi berkesimpulan bahwa para pemimpin partai UDT bertanggung jawab karena ikutserta dalam pelanggaran hak rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri dengan menugaskan orang-orangnya membantu pasukan invasi Indonesia, mengundang Indonesia untuk melakukan invasi ke Timor-Leste, dan menandatangani Deklarasi Balibó, yang ikut memberikan kesan legitimasi atas pendudukan dan aneksasi tidak sah Indonesia atas wilayah ini.

Anggota UDT yang ikut latihan pasukan Indonesia di Timor Barat setelah September 1975 dan terlibat dalam invasi militer ke Timor-Leste, mengikuti personel militer Indonesia dan membantu mereka baik secara militer maupun dalam memberikan pemahaman lokal dan serta informasi intelijen. Pemimpin dan anggota UDT yang terlibat dalam operasi tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran di mana mereka terlibat langsung dan di mana mereka membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Komisi berkesimpulan bahwa para pemimpin UDT membantu Indonesia dengan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada PBB dan negara-negara anggotanya pada periode setelah invasi Indonesia. Tindakan ini menghambat anggota masyarakat internasional untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai situasi di Timor-Leste, yang mungkin bisa dijadikan dasar bagi inisiatif internasional atas nama masyarakat Timor-Leste. Dengan peran ini mereka turut serta menciptakan penderitaan rakyat Timor, di mana mereka harus memikul tanggung jawab moral.

Temuan utama mengenai tanggung jawab partai politik Apodeti

Meskipun Komisi menerima laporan yang jauh lebih sedikit mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Apodeti dibanding Fretilin maupun UDT, bukti-bukti jelas menunjukkan bahwa di samping peran langsung mereka dalam pelanggaran, anggota Apodeti ikut terlibat dalam invasi Indonesia dan mendukung pendudukan militer dengan berbagai cara.

Anggota Apodeti bekerja dengan intel Indonesia, baik militer maupun sipil, di Timor-Leste dan di tempat-tempat lain di Indonesia sepanjang 1974-75. Mereka bertanggung jawab karena menghambat proses dekolonisasi dan stabilisasi situasi di Timor-Leste.

Sejak Desember 1974 sekitar 200 anggota Apodeti ikut latihan militer di dekat Atambua, Timor Barat, yang diikuti oleh keterlibatan mereka dengan personel militer Indonesia, dalam aksi militer terselubung di Timor-Leste sejak Agustus 1975 dan kemungkinan lebih awal, termasuk serangan ke Balibó pada 16 Oktober 1975. 'Partisan' Timor ini kemudian mengambil bagian dalam invasi Timor-Leste, mengikuti personel militer Indonesia dan membantu mereka secara militer dan memberikan pemahaman lokal serta informasi intelijen. Para pemimpin dan anggota Apodeti yang terlibat dalam operasi ini bertanggung jawab atas pelanggaran di mana mereka

terlibat langsung dan di mana mereka ikutserta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka bertanggung jawab atas konsekuensi penandatanganan Deklarasi Balibó, yang memberikan kesan legitimasi atas pendudukan dan aneksasi Indonesia yang tidak sah atas wilayah ini.

Para pemimpin Apodeti dan mereka yang terlibat langsung dalam menyusun daftar dan menunjuk orang-orang yang menjadi sasaran pasukan Indonesia selama invasi, bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan mereka, termasuk penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan orang-orang yang mereka identifikasi.

Temuan utama mengenai tanggung jawab partai KOTA dan Tralabalista

Meskipun anggota partai Tralabalista dan KOTA tidak disebut sebagai pelaku langsung pelanggaran, mereka memainkan peran dalam mendukung invasi dan pendudukan Indonesia, dan karena itu membantu dalam pelanggaran berskala besar yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia. Dengan mengangkat senjata sebagai pasukan 'Partisan', anggota partai-partai ini juga bertanggung jawab membantu invasi dan pendudukan Indonesia.

Anggota Tralabalista dan KOTA juga membantu dalam penyusunan dan penandatanganan Deklarasi Balibó yang memberikan kesan legitimasi kepada pendudukan dan aneksasi Indonesia yang tidak sah atas Timor-Leste.

Metodologi untuk mengidentifikasi tanggung jawab lembaga

Sebanyak 85.164 pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan kepada Komisi selama proses pengambilan pernyataan. Setiap pelanggaran yang disebut dalam pernyataan korban atau saksi dimasukkan dalam basis data Komisi. Identitas pelaku, lembaga tempat mereka bekerja, serta kapan, di mana, dan bagaimana pelanggaran dilakukan juga dicatat. Dengan mengabungkan semua informasi ini, Komisi bisa menyusun data, misalnya, tentang skala pelanggaran menurut jenis dan kelompok pelaku yang paling sering disebut bertanggung jawab atas pelanggaran. Komisi juga bisa memerinci kategori-kategori ini untuk mendapatkan data tentang kecenderungan dan pola pelanggaran, pelaku, dan korban menurut rentang waktu dan tempat.

Di samping informasi kuantitatif yang diambil dari basis data, Komisi juga mengumpulkan sejumlah besar informasi kualitatif, termasuk perincian kejadian yang diberikan saksi dan korban dalam pernyataan dan wawancara, dan sumber sekunder. Kebanyakan bukti kualitatif ini dimasukkan dalam bab-bab di Laporan ini di Bagian 7, yang membicarakan pelanggaran-pelanggaran jenis khusus.

Lampiran 1 Bagian ini, yang berjudul “Tabel pelanggaran yang dilaporkan” terdiri atas tabel-tabel yang merangkum jumlah total pelanggaran yang dilaporkan menurut identitas lembaga pelaku. Lampiran ini punya tabel-tabel terpisah untuk setiap jenis pelanggaran, termasuk jumlah total dan persentase kasus pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaannya, Fretilin/Falintil, UDT, dan Apodeti. Setiap tabel dilengkapi dengan tabel lain yang memberi perincian data mengenai berbagai unsur pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaannya. Tabel ini memberikan jumlah kasus di mana militer dan polisi Indonesia bertindak sendiri, kelompok binaan Timor (seperti Hansip dan kelompok milisi) bertindak sendiri, dan total jumlah kasus yang dilaporkan di mana pelaku yang diidentifikasi adalah militer dan polisi Indonesia yang bertindak bersama kelompok binaan Timor. Tabel terpisah juga dibuat yang hanya berisi data yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilaporkan terjadi pada 1999. Tabel-tabel di Lampiran 1 yang relevan dengan segmen-segmen tertentu dalam Bagian laporan ini juga dicantumkan dalam segmen-segmen bersangkutan.

Lampiran Bagian ini yang berjudul “pemerintah Indonesia dan pasukan keamanan—analisa mikro kelembagaan” memberikan daftar unit militer dan unit lain yang paling sering diidentifikasi dalam basis data sebagai pelaku pelanggaran dan, bila tersedia informasinya, komandan dan perwira senior mereka. Karena keterbatasan proses pengambilan pernyataan (lihat Bagian 6: Profil pelanggaran hak asasi manusia), analisa ini tidak ditujukan untuk mengidentifikasi secara pasti unit-unit serta individu yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam jumlah paling besar. Namun demikian, berdasar jumlah total bukti yang ada, baik kualitatif maupun kuantitatif, Komisi percaya bahwa unit-unit ini benar-benar melakukan pelanggaran dalam skala besar dan jika dimungkinkan untuk mengidentifikasi komandan serta perwira senior mereka, maka mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan unit-unit tersebut.

Dalam kaitannya dengan data di semua tabel, kelompok pelaku bersifat eksklusif. Artinya, setiap pelanggaran dilakukan oleh satu dan hanya satu kategori lembaga pelaku.

Tabel berikut memberikan ringkasan mengenai keterkaitan pelaku pelanggaran hak asasi manusia dengan lembaga yang dilaporkan kepada Komisi, berdasar pada identifikasi yang diberikan oleh saksi dan korban yang memberikan pernyataan. Tabel serupa yang khusus menampilkan pelanggaran-pelanggaran pada 1999 yang dilaporkan dimasukkan pada segmen akhir dari Bagian ini, yaitu mengenai tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan pada 1999.

Tabel 1 – Tanggung jawab pelaku atas pelanggaran yang dilaporkan ke CAVR: 1974-1999

| Jenis pelanggaran | Jumlah total pelanggaran yang dilaporkan ke CAVR | Total pelanggaran oleh militer Indonesia, polisi & kelompok binaannya | Total pelanggaran oleh Fretilin/ Falintil | Total pelanggaran oleh UDT | Total pelanggaran oleh Apodeti | Lain-lain |
|----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Semua pelanggaran | 85.164 | 71.917 | 8.306 | 2.151 | 344 | 2.446 |
| | 100% | 84,40% | 9,80% | 2,50% | 0,40% | 2,90% |
| Pembunuhan tidak sah | 5.108 | 3.455 | 1.297 | 150 | 41 | 165 |
| | 100% | 67,60% | 25,40% | 2,90% | 0,80% | 3,20% |
| Penghilangan | 833 | 719 | 71 | 8 | 1 | 34 |
| | 100% | 86,30% | 8,50% | 1,00% | 0,10% | 4,90% |
| Penyiksaan | 19.578 | 16.150 | 2.250 | - | - | 1.178 |
| | 100% | 82,5% | 11,5% | - | - | 6,0% |
| Penahanan | 25.347 | 20.779 | 3.001 | 831 | 90 | 646 |
| | 100% | 82,00% | 11,80% | 3,30% | 0,40% | 2,50% |
| Penganiayaan | 8.436 | 6.706 | 917 | 379 | 24 | 410 |
| | 100% | 79,50% | 10,90% | 4,50% | 0,30% | 4,90% |
| Kekerasan seksual | 853 | 796 | 27 | 1 | - | 29 |
| | 100% | 93,30% | 3,20% | 0,10% | - | 3,40% |
| Pemindahan paksa | 13.967 | 13.166 | 426 | 106 | 86 | 183 |
| | 100% | 94,30% | 3,10% | 0,80% | 0,60% | 1,30% |
| Perekutan paksa | 2.157 | 1.986 | 94 | 34 | 1 | 42 |
| | 100% | 92,10% | 4,40% | 1,60% | 0,00% | 1,90% |
| Pelanggaran harta benda/ ekonomi | 4.735 | 4.096 | 348 | 53 | 43 | 195 |
| | 100% | 86,50% | 7,30% | 1,10% | 0,90% | 4,10% |

Tabel 2. Perincian tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia atas pelanggaran yang dilaporkan kepada CAVR: 1974-1999

| Pelanggaran oleh: | Militer dan polisi Indonesia serta kelompok binaannya | Kelompok Timor binaan militer Indonesia bertindak sendiri | Militer dan polisi Indonesia bertindak sendiri | Militer dan polisi Indonesia bertindak bersama kelompok binaannya |
|---------------------------------|--|--|---|--|
| Semua pelanggaran | 71.917 | 14.704 | 43.323 | 13.550 |
| | 84,40% | 17,30% | 50,90% | 15,90% |
| Pembunuhan tidak sah | 3.455 | 835 | 1.972 | 630 |
| | 67,60% | 16,30% | 38,60% | 12,30% |
| Penghilangan | 719 | 105 | 494 | 120 |
| | 86,30% | 12,60% | 59,30% | 14,40% |
| Penyiksaan | 16.110 | 4.380 | 8.890 | 2.880 |
| | 82,5% | 22,4% | 4,54% | 14,7% |
| Penahanan | 20.779 | 3.005 | 12.004 | 5.630 |
| | 82,00% | 11,90% | 47,40% | 22,20% |
| Penganiayaan | 6.706 | 2.059 | 3.341 | 1.287 |
| | 79,50% | 24,40% | 39,60% | 15,30% |
| Kekerasan seksual | 796 | 184 | 518 | 89 |
| | 93,30% | 21,60% | 60,70% | 1,40% |
| Pemindahan paksa | 13.166 | 1.451 | 10.144 | 1.521 |
| | 94,30% | 10,40% | 72,60% | 10,90% |
| Perekrutan paksa | 1.986 | 426 | 1.221 | 333 |
| | 92,10% | 19,70% | 56,60% | 15,40% |
| Pelanggaran harta benda/ekonomi | 4.096 | 2.256 | 1.032 | 773 |
| | 86,50% | 47,60% | 21,80% | 16,30% |

Identifikasi pelaku dalam basis data pelanggaran hak asasi manusia

Analisa dari 85.164 pelanggaran yang dilaporkan menurut keterkaitan lembaga pelaku menghasilkan kesimpulan umum berikut:

- Anggota pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaan mereka bertanggung jawab atas sebagian besar dari semua kategori pelanggaran yang dilakukan selama periode setelah invasi. Mereka diidentifikasi sebagai pelaku dalam 84.4% (71.917/85.164) total pelanggaran yang dilaporkan kepada Komisi.
- Anggota ABRI/TNI dan polisi merupakan kategori pelaku yang bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran.
- Anggota pasukan binaan yang orang Timor, termasuk Hansip dan milisi, yang hampir semuanya dipersenjatai, didanai, dan dikontrol oleh militer Indonesia, juga bertanggung jawab atas banyak pelanggaran, meskipun lebih sedikit dibanding ABRI/TNI. Laporan mengenai pelanggaran oleh pasukan binaan ini secara proporsional jauh lebih tinggi pada 1999 dibanding periode-periode konflik lainnya.
- Setelah wakil-wakil pasukan keamanan Indonesia, anggota Fretilin/Falintil diidentifikasi sebagai kelompok pelaku terbesar kedua, meskipun menurut laporan jumlah pelanggaran yang mereka lakukan jauh lebih sedikit dibanding pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pasukan keamanan Indonesia. Anggota Fretilin/Falintil diidentifikasi sebagai pelaku dalam 9.8% (8.306/85.164) total jumlah pelanggaran yang dilaporkan kepada Komisi.
- Kebanyakan pelanggaran dilaporkan dan yang dilakukan oleh anggota Fretilin/Falintil terjadi selama konflik internal partai pada 1975 dan tahun-tahun setelahnya.
- Proporsi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota UDT cukup banyak selama dan setelah periode konflik bersenjata internal pada Agustus 1975.
- Jumlah pelanggaran yang dilaporkan yang dilakukan oleh UDT jauh lebih sedikit dibanding yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil. Anggota UDT diidentifikasi sebagai pelaku dalam 2.5% (2.151/85.164) dari jumlah total kasus yang dilaporkan ke Komisi.
- Ada sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil atau kelompok prokemerdekaan lain sepanjang 1999.

Tanggung jawab dan pertanggungjawaban pasukan keamanan Indonesia

Di setiap desa dulu ada, dan sekarang masih ada, penjara dan setiap hari lima sampai sepuluh orang disiksa, disundut dengan rokok, disetrum secara sistematis dengan listrik tegangan tinggi, atau dijadikan korban pisau belati Nanggala. Mereka menarik kuku dan menjepit alat kelamin dengan tang. Mereka meletakkan jari-jari korban di bawah kursi meja, dan Baret Merah pembunuh duduk di atasnya. Semua ini terjadi selama interogasi untuk mendapatkan informasi tentang organisasi orang-orang di kamp konsentrasi. Kemudian [terjadi] pembunuhan. Eksekusi penembakan massal, dengan korban mati di depan kuburan yang mereka gali sendiri. Atau mereka mati karena dibenamkan dalam tong penuh air. Keluarga korban kemudian diberi tahu bahwa mereka “pergi belajar ke Jakarta”. Kemudian, seolah-olah semua ini tidak cukup, perempuan pejuang atau istri korban yang dibantai, dibawa untuk interogasi pada malam hari. Mereka harus menyerahkan diri, di bawah ancaman pembunuhan, untuk memuaskan Nanggala, polisi, Koramil, Kodim, karena para perempuan ini dituduh punya hubungan dengan Fretilin. Pejuang dan anggota Fretilin yang tertangkap diinterogasi untuk menarik informasi mengenai resistansi dengan siksaan yang sangat kejam, sampai mereka meninggal, dan setelah itu mereka diikat di belakang mobil dan diseret keliling desa sementara penduduk desa dipaksa melihat dan “menyambut kedatangan Fretilin ke desa”. Para perempuan yang tertangkap di hutan tidak bisa menghindari dari [tindakan] kriminal [terhadap mereka]. Mereka ditelanjangi, rambut mereka dicukur, dan disuruh berjalan di antara orang-orang yang berjajar dan dipaksa memermalukan mereka.

Xanana Gusmão 14 Oktober 1982. Surat kepada Sidang Umum PBB ke-37.⁷

Bukti yang mendasari segmen ini

Di samping 8.000 pernyataan dan 85.164 pelanggaran yang dilaporkan, Komisi melakukan wawancara dengan saksi, termasuk orang-orang yang bertugas dalam militer, polisi, dan pemerintahan sipil Indonesia, serta anggota kelompok binaan seperti Hansip dan kelompok milisi. Bahan-bahan sekunder, termasuk dokumen resmi militer Indonesia, juga dipertimbangkan.

⁷ Xanana Gusmão, *To Resist Is To Win!*, diedit oleh Sarah Niner, Aurora Books, 2000, hal. 77-78.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia.

Tabel 3- Semua pelanggaran yang dilaporkan, 1974-1999

| Pelaku | Jumlah | Persentase |
|--|---------------|--------------|
| Militer dan polisi Indonesia yang bertindak sendiri | 43.323 | 50,9 |
| Kelompok binaan Timor yang bertindak sendiri | 14.704 | 17,3 |
| Militer dan polisi Indonesia bersama kelompok binaan Timor | 13.550 | 15,9 |
| Gerakan resistansi | 8.772 | 10,3 |
| Lembaga lain | 4.167 | 4,9 |
| Penduduk sipil | 450 | 0,5 |
| Kelompok pro-otonomi | 198 | 0,2 |
| Total | 85.164 | 100,0 |

Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa

Komisi berkesimpulan bahwa kurang lebih 18.600 pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa orang-orang Timor nonpetempur dilakukan antara 1974 dan 1999. Bagian terbesar, yaitu 70%, dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, termasuk kelompok binaan Timor.^{*} Sifat dan skala pembunuhan dan penghilangan ini berubah seiring waktu mengikuti perubahan fase pendudukan Indonesia, yang mencapai puncaknya pada 1978-79, 1983-84 dan 1999. Namun demikian, Komisi berkesimpulan bahwa dilakukannya pembunuhan dan penghilangan paksa secara konsisten oleh militer Indonesia selama pendudukan dan impunitas yang dimiliki oleh pelaku menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian integral dari strategi Indonesia untuk memperkuat kekuasaan di wilayah Timor-Leste melalui sarana teror.

Tabel 4 - Kasus pembunuhan di luar hukum yang dilaporkan, 1974-1999

| Pelaku | Jumlah | Persentase |
|--|--------------|--------------|
| Militer dan polisi Indonesia & kelompok binaan Timor | 3.455 | 67,6 |
| Fretilin & Falintil | 1.297 | 25,4 |
| Lembaga lain | 165 | 3,2 |
| UDT | 150 | 2,9 |
| Apodeti | 41 | 0,8 |
| Total | 5.108 | 100,0 |

^{*} Kelompok binaan terdiri atas kelompok "pertahanan sipil" (termasuk Hansip, Ratih, Wanra, dan Kamra), anggota pemerintah sipil setempat yang bertindak dalam peran "keamanan", kelompok paramiliter (seperti Tonsus dan berbagai tim yang menjadi cikal bakal kelompok milisi yang dibentuk pada 1998-99), serta kelompok milisi sendiri.

Tabel 5: Perincian kelompok pelaku: pembunuhan di luar hukum 1974-1999

| Pelaku | Jumlah | Persentase |
|--|--------------|--------------|
| Militer dan Polisi Indonesia bertindak sendiri | 1.972 | 38,6 |
| Gerakan resistansi | 1.335 | 26,1 |
| Kelompok binaan Timor bertindak sendiri | 835 | 16,3 |
| Militer dan polisi Indonesia dan kelompok binaan Timor | 630 | 12,3 |
| Lembaga lain | 270 | 5,3 |
| Penduduk sipil | 45 | 0,9 |
| Kelompok pro-otonomi | 21 | 0,4 |
| Total | 5.108 | 100,0 |

Tabel 6: Penghilangan paksa, 1974-1999

| Pelaku | Jumlah | Persentase |
|--|------------|--------------|
| Militer dan Polisi Indonesia & Kelompok Binaan Timor | 719 | 86,3 |
| Fretilin & Falintil | 71 | 8,5 |
| Lembaga lain | 34 | 4,1 |
| UDT | 8 | 1,0 |
| Apodeti | 1 | 0,1 |
| Total | 833 | 100,0 |

Tabel 7: Perincian kelompok pelaku: penghilangan paksa, 1974-1999

| Pelaku | Jumlah | Persentase |
|--|------------|--------------|
| Militer dan polisi Indonesia bertindak sendiri | 494 | 59,3 |
| Militer dan polisi Indonesia bersama kelompok binaan Timor | 120 | 14,4 |
| Kelompok binaan Timor bertindak sendiri | 105 | 12,6 |
| Gerakan resistansi | 76 | 9,1 |
| Lembaga lain | 36 | 4,3 |
| Kelompok Pro-Otonomi | 1 | 0,1 |
| Penduduk sipil | 1 | 0,1 |
| Total | 833 | 100,0 |

Teror dan impunitas

Dalam upaya menghancurkan resistansi terhadap pendudukan, ABRI/TNI menggunakan teror sebagai strategi untuk memaksa penduduk patuh. ABRI/TNI melakukan hal ini dengan mengarahkan dan membiarkan personelnya terlibat dalam tindakan kejam terhadap siapa saja yang dicurigai mempunyai kaitan dengan Resistansi.

Di setiap budaya, terutama di antara anggota lembaga yang dipercaya menggunakan kekerasan fisik terhadap orang lain, ada orang-orang yang mendapatkan kesenangan dengan menggunakan wewenang ini terhadap korban yang tidak berdaya. Komandan dan pemimpin senior ABRI/TNI membiarkan praktik-praktik kejam tanpa dihukum dan mendorong budaya lembaga di mana penyiksaan, perkosaan, dan eksekusi sewenang-wenang diterima sebagai prosedur standar. Selama periode pendudukan (1975-1999), metode dan situasi di mana petugas pasukan keamanan Indonesia melakukan pembunuhan di luar hukum termasuk:

- Praktik umum membunuh tahanan secara perlahan-lahan dengan menelanjangi mereka sendirian, tanpa makanan dan air, di sel gelap, setelah disiksa berulang-ulang dalam jangka lama
- Membunuh tahanan di penjara tentara dengan memukul berulang-ulang serta menyiksa dalam jangka lama
- Eksekusi penduduk sipil tidak bersenjata dengan menembak dari jarak dekat
- Menembak secara membabi buta ke segala arah dengan sasaran penduduk sipil tidak bersenjata
- Melakukan pembunuhan terencana terhadap orang-orang yang dicurigai yang namanya tercantum dalam daftar yang dibuat personel militer
- Eksekusi tahanan di pusat penahanan, dan di tempat-tempat terpencil di desa-desa, termasuk telaga, jurang, dan jembatan
- Eksekusi langsung setelah ditangkap dalam operasi militer
- Menyuruh korban menggali kuburan sendiri sebelum dieksekusi
- Menyuruh korban berdiri berjajar, sebelum dieksekusi baris per baris
- Membagi penduduk sipil menurut jenis kelamin, dan mengeksekusi penduduk laki-laki
- Melempar granat ke arah penduduk sipil tidak bersenjata
- Melempar orang yang masih hidup ke jurang, kadang setelah dilukai
- Memaksa penduduk sipil membunuh orang lain, dengan ancaman nyawa mereka
- Perkosaan dan penyiksaan seksual terhadap korban perempuan sebelum dieksekusi
- Mengikat korban ke mobil yang berjalan dan menyeret korban di depan umum sepanjang jalan sampai meninggal
- Membakar orang hidup-hidup

- Mengubur orang hidup-hidup
- Mengikat korban di kayu palang dan mengeksekusi mereka
- Menunjukkan telinga dan alat kelamin korban ke keluarga orang yang hilang

Sebagai unsur dalam menciptakan ketakutan, eksekusi terhadap musuh sering dilakukan secara terbuka. Fakta bahwa eksekusi semacam ini terjadi di muka umum memberikan bukti kuat bahwa praktik ini bersifat sistematis dan disetujui lembaga militer Indonesia. Eksekusi ini, kalau tidak diperintahkan atasan, paling tidak disetujui oleh komandan senior, dan petugas bisa menyiksa dan membunuh lawan politik secara terbuka tanpa ada proses hukum atau alasan jelas, dan tanpa takut dimintai pertanggungjawaban. Beberapa contoh eksekusi terbuka yang dilaporkan oleh saksi kepada Komisi adalah:

- Memukul korban sampai mati di depan umum
- Memenggal kepala dengan kampak di depan umum
- Memotong bagian tubuh korban secara terbuka saat korban masih hidup
- Mempertontonkan kepala yang dipenggal, atau bagian tubuh yang dipotong di depan umum
- Eksekusi terbuka terhadap suami istri, di mana keduanya ditelanjangi, kemudian dipukul di belakang kepala, sampai mendorong mereka ke lubang yang sudah digali
- Mempertontonkan mayat di depan umum

Pembunuhan di luar hukum yang terkait dengan operasi militer

Pembunuhan di luar hukum sebelum invasi skala penuh ke Timor-Leste

Sebelum invasi skala penuh ke Timor-Leste pada 7 Desember 1975, unit Pasukan Khusus ABRI (Kopassandha) mempersenjatai dan melatih anggota Apodeti dan UDT di Timor Barat (Indonesia), dan menyebut mereka 'Partisan'. Pasukan Indonesia dan para 'Partisan' melancarkan operasi terselubung di wilayah Timor-Leste antara Agustus dan Desember 1975, di mana mereka membunuh secara tidak sah puluhan penduduk sipil di Distrik Bobonaro, Covalima, dan Ermera. Komisi berkesimpulan bahwa Pemerintah Indonesia, lembaga ABRI/TNI, perwira, dan anggota Kopassandha sebagai pribadi, serta para 'Partisan' yang terlibat, bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan kematian penduduk sipil ini.

Pembunuhan di luar hukum dan eksekusi sewenang-wenang selama operasi

Invasi ke Timor-Leste merupakan pelanggaran hukum internasional yang mengatur penggunaan kekuatan bersenjata yang diizinkan.^{*} Tidak hanya invasi Indonesia

.....
^{*} Prinsip hukum internasional yang digunakan Komisi dibicarakan pada Bagian 2: Mandat Komisi; lihat juga Bab 7.5: Pelanggaran hukum perang

secara paksa ke wilayah ini yang merupakan pelanggaran berat, tetapi cara invasi ini dilakukan juga melibatkan pelanggaran besar-besaran terhadap penduduk sipil, tahanan, orang sakit, dan terluka. Anggota ABRI tidak membatasi serangan mereka pada orang yang menentang pendudukan atau petempur bersenjata. Mereka sering mengincar penduduk sipil dan tidak membedakan antara sasaran sipil dan militer selama operasi ini dan operasi selanjutnya yang ditujukan untuk menaklukkan penduduk.

Di ibukota, Dili, pada 7-8 Desember 1975 tentara Indonesia mengeksekusi puluhan penduduk sipil, termasuk perempuan, di daerah-daerah kota yang dipertahankan dengan sengit untuk menentang invasi bersenjata Indonesia. Daerah-daerah ini termasuk Colmera, Vila Verde, Matadouro, Sungai Maloa, dan Ailok Laran. Mereka juga mengincar anggota Fretilin yang tertangkap serta keluarga mereka dan mengeksekusi beberapa orang ini sehari setelah invasi.

Komisi menerima banyak laporan mengenai pasukan Indonesia yang membunuh penduduk sipil saat mereka bergerak ke daerah-daerah lain di wilayah ini selama 1976-78. Kadang mereka yang terbunuh dinyatakan sebagai anggota Fretilin, tetapi banyak korban pembunuhan ini adalah penduduk sipil yang dijadikan sasaran secara acak. Penduduk sipil biasa diincar dalam berbagai kesempatan lain: saat mencari makanan atau melakukan kegiatan sehari-hari, saat bertemu dengan pasukan keamanan Indonesia selama operasi mereka, sebagai balasan atas serangan Falintil, dan karena dicurigai mempunyai hubungan dengan atau tahu tentang Fretilin/Falintil.

Komisi berkesimpulan bahwa saat melancarkan serangan ke basis-basis Fretilin/Falintil dan menyerang posisi mereka dan sebagai akibat dari operasi tersebut, pasukan keamanan Indonesia membunuh penduduk sipil dan orang lain yang tidak terlibat pertempuran, termasuk petempur yang menyerah atau tertangkap. Kebanyakan laporan mengenai hal ini yang diterima Komisi berkaitan dengan periode 1977-79, saat banyak orang yang melarikan diri ke gunung dan menyerah atau tertawan pasukan keamanan Indonesia dieksekusi. Beberapa orang yang dieksekusi adalah anggota Fretilin dan Falintil, yang menyerah setelah menerima jaminan pribadi dari personel ABRI, anggota aparat pasukan keamanan lain, atau pemerintah sipil bahwa mereka akan aman karena ditawarkan amnesti yang pertama kali dinyatakan oleh Presiden Soeharto pada November 1977 dan kemudian diperbarui.

Komisi menerima informasi yang menunjukkan bahwa pelanggaran semacam ini terus dilakukan setelah itu. Misalnya, Komisi menemukan bahwa pada September 1981, pada akhir Operasi Kikis pada Juni-September 1981, Batalion 321, 744 dan/atau 745, Unit Marinir, dan Hansip menyerang pasukan Falintil yang berkumpul di daerah Gunung Aitana di perbatasan Manatuto-Viqueque dan kemudian mengeksekusi lebih daripada seratus orang, bahkan mungkin beberapa ratus orang, pasukan Falintil dan penduduk sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, yang mengikuti mereka. Saat mereka dibunuh, nasib para korban berada di tangan pasukan Indonesia atau mereka ditahan setelah menyerah atau ditangkap.

Pembunuhan dan penghilangan secara sistematis dengan sasaran pribadi atau kelompok

Selama awal-awal pendudukan, tetapi secara khusus pada 1978-1979 dan 1983-84, komandan dan pasukan ABRI serta kelompok binaan melakukan pembunuhan secara sistematis dan dalam skala luas serta penghilangan paksa terhadap orang-orang yang aktif sebagai anggota Resistansi dan orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan klandestin dengan anggota Fretilin/Falintil yang masih bertempur.

Dalam kebanyakan insiden ini pasukan keamanan Indonesia menyebarkan jaring-jaring mereka begitu lebar sampai-sampai tidak mungkin membedakan antara pembunuhan terencana dengan hukuman kolektif dan proksi seperti dijelaskan berikut.

Setelah serangan di Dili pada 10 Juni 1980, misalnya, mereka yang ditangkap, beberapa di antaranya termasuk dalam 121 orang yang dilaporkan kepada Komisi telah dibunuh atau dihilangkan, adalah orang-orang yang terlibat dalam serangan: orang-orang yang dikenal memainkan peran aktif dalam Resistansi sebelum menyerah atau ditangkap tetapi yang diyakini tidak terlibat dalam serangan; orang-orang yang mempunyai peran pendukung dalam menyiapkan serangan tetapi tidak ikut terlibat secara langsung dalam serangan; orang-orang yang mungkin masih aktif di Resistansi tetapi tidak aktif terlibat dalam serangan; dan orang-orang tidak bersalah yang kebetulan bertugas jaga di tempat-tempat dekat lokasi serangan pada malam 9-10 Juni. Komisi mencatat bahwa menurut hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter, hak atas hidup bagi semua kategori nonpetempur bersifat absolut, dan karena itu pembunuhan di luar hukum dan penghilangan adalah tindakan tidak sah, apapun alasan mengapa korban dijadikan sasaran. Sejauh dimungkinkan, Komisi membedakan antara hukuman kolektif dan bentuk-bentuk pembunuhan dan penghilangan yang lebih terarah bukan karena salah satu lebih ringan dibanding lainnya—karena keduanya sama-sama berat—tetapi untuk memilah pertanggungjawaban.

Pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaan mereka melakukan kampanye pembunuhan dan penghilangan dalam skala luas dan sistematis yang ditujukan kepada anggota Fretilin dan Falintil yang menyerah atau tertangkap pada Februari-Juni 1979. Komisi berkesimpulan bahwa pembunuhan dan penghilangan ini dilakukan sebagai bagian dari rencana sistematis, yang disusun di tingkat paling atas struktur komando militer dan dikoordinasi oleh Korem Timor Timur yang baru dibentuk di bawah kepemimpinan Kolonel Adolf Sahala Rajagukguk, yang bertujuan melenyapkan pemimpin dan aktivis gerakan Resistansi yang masih hidup. Komisi sampai pada kesimpulan ini atas dasar sejumlah pertimbangan, termasuk skala dan sifat pembunuhan dan penghilangan yang luas, sasarannya yang sudah diketahui, waktunya, perlakuan yang sama terhadap para korban, dan persamaan-persamaan lain berkaitan dengan cara yang digunakan selama kampanye di banyak distrik, dan keterlibatan unit militer dari segala tingkat struktur komando.

Setelah gencatan senjata antara pasukan Indonesia dan Resistansi gagal pada Maret 1983 dan dilancarkannya Operasi Persatuan untuk menumpas Resistansi, militer Indonesia mengincar penduduk sipil yang terlibat kegiatan klandestin. Komisi menerima kesaksian tentang eksekusi dan penghilangan lebih daripada 250 penduduk sipil di distrik Lautém, Viqueque, Baucau, Dili, Aileu, Manufahi, Ainaro, Bobonaro, dan Covalima antara Agustus 1983 dan pertengahan 1984 (termasuk mereka yang dibunuh di Viqueque setelah serangan di Kraras), serta penangkapan, penahanan, dan penyiksaan serta penganiayaan terhadap banyak orang lain.

Meskipun kampanye ini dinyatakan untuk menghancurkan jaringan klandestin Resistansi, pada kenyataannya kampanye ini dilakukan secara sistematis dan dalam skala luas. Sifat eksekusi yang sistematis tampak jelas oleh Komisi dari skala dan dari bukti dokumenter yang diterima Komisi mengenai kepala desa dan anggota pasukan pertahanan sipil yang diperintahkan untuk menyusun daftar nama orang yang aktif dalam Resistansi di masa lalu, yang dalam beberapa kasus paling tidak menjadi dasar pelanggaran yang dilakukan setelahnya. Selain itu, seperti eksekusi dan penghilangan pada 1978-79, operasi yang sama pada 1983-84 melibatkan mobilisasi berbagai lembaga dalam aparat keamanan dan pemerintahan sipil, termasuk Pasukan Khusus (Kopassus), semua tingkatan struktur teritorial, batalion tempur, pasukan pertahanan sipil, kelompok paramiliter, polisi militer dan sipil, serta pegawai pemerintah setempat.

Sifatnya yang tidak pandang bulu jelas terlihat dari apa yang diketahui tentang beberapa korban. Misalnya, Komisi tahu bahwa banyak di antara sekitar 40 orang yang ditangkap di Bobonaro dan Covalima yang kemudian dieksekusi atau dihilangkan dari Koramil Bobonaro pada Desember 1983 tidak memiliki hubungan dengan Resistansi kecuali nama mereka yang mirip dengan nama orang-orang yang mempunyai hubungan dengan resistansi.

Hukuman kolektif dan proksi terhadap penduduk sipil oleh ABRI/TNI

Selama pendudukan, tetapi khususnya pada awal dekade 1980-an, komandan dan pasukan ABRI serta kelompok binaan melakukan pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa terhadap penduduk sipil sebagai hukuman kolektif kepada masyarakat yang dicurigai mendukung pasukan Falintil. Hukuman yang sewenang-wenang terhadap orang-orang yang diketahui pernah terlibat dengan gerakan Resistansi dan hukuman kolektif terhadap masyarakat terutama sangat kejam setelah terjadi serangan Falintil terhadap sasaran militer. Komisi berkesimpulan bahwa praktik tidak sah dan tidak bermoral berupa hukuman kolektif atau proksi, dengan sasaran korban yang tidak bersalah, karena tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang lolos penangkapan, merupakan bagian utama serta sistematis strategi militer Indonesia untuk melenyapkan resistansi terhadap pendudukan militer. Komandan dan pasukan ABRI/TNI melakukan hukuman kolektif terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata sebagai balasan atas serangan Falintil sejak awal pendudukan. Di antara insiden yang dilaporkan ialah sejumlah peristiwa di mana banyak penduduk

sipil ditahan dan disiksa, perempuan diperkosa, dan penduduk sipil tidak bersenjata yang tidak terlibat dalam serangan Falintil dieksekusi atau dihilangkan.

Minggu-minggu setelah serangan yang dipimpin Falintil terhadap pos dan fasilitas ABRI di sekitar Mau Chiga (Hatu Bulico) dan Rotuto (Same, Manufahi) pada 20 Agustus 1982, ABRI dan Hansip melancarkan aksi balas dendam besar-besaran untuk menghukum seluruh penduduk Mau Chiga dan desa-desa sekitar. Selama operasi ini penduduk, yang kebanyakan tidak ikut terlibat serangan Falintil, mengalami berbagai pelanggaran hak mereka, termasuk penahanan, penyiksaan, perkosaan, dan pelanggaran seksual lainnya, pemindahan paksa ke Pulau Atauro dan tempat-tempat lain, dan eksekusi. Di semua tempat di mana penduduk Mau Chiga dipaksa pindah, para tahanan dibuat kelaparan sebagai bentuk hukuman. Komisi menyusun sebuah daftar sekitar 120 orang yang meninggal karena sebab-sebab yang berhubungan dengan kelaparan sebagai suatu bentuk hukuman atas serangan pada 20 Agustus 1982. Paling tidak, 75 penduduk laki-laki dari Mau Chiga dieksekusi oleh ABRI dan pasukan pertahanan sipil antara 1982 dan 1987. Kebanyakan dibunuh secara sangat kejam, baik di depan umum maupun di lokasi eksekusi, bernama Jakarta 2, di Bulico, dekat kota Ainaro, di mana korban didorong masuk jurang. Dalam sebuah proyek khusus yang dilakukan Komisi, Komisi menerima banyak kesaksian bahwa personel dari Kodim Ainaro dan Manufahi, Koramil Dare, Batalion Zipur 5, serta Hansip, termasuk komandan mereka, terlibat dalam pelanggaran ini.

Setelah serangan oleh Ratih di Kraras (Viqueque) pada 8 Agustus 1983, di mana 12 tentara Indonesia terbunuh, diikuti dengan pembelotan para anggota Ratih ini, pasukan keamanan Indonesia melakukan balas dendam terhadap penduduk di daerah ini pada September-Oktober 1983. Serangan balasan ini termasuk serangkaian eksekusi, termasuk eksekusi massal. Dalam peristiwa terpisah yang dilaporkan ke Komisi sekitar 270 orang dibunuh dalam kelompok yang mencapai 181 orang. Berbagai pasukan militer dan kelompok binaan dilaporkan melakukan eksekusi, termasuk anggota Kodim 1630/Viqueque, Batalion 328, 501 dan 745, Kopassus, dan Hansip.

Setelah desersi lebih daripada 30 anggota Hansip bersenjata, bersama keluarga mereka serta anggota kelompok pemuda klandestin di Mehara (Lautém) pada 9 Agustus 1983, dan pembelotan dengan skala yang lebih kecil di Leuro di Subdistrik Lospalos dan Serelau di Subdistrik Moro, serta ditemukannya rencana untuk melakukan hal yang sama di Subdistrik Iliomar, pasukan militer Indonesia menahan ratusan penduduk laki-laki dan perempuan di seluruh distrik ini, mengeksekusi dan menyebabkan hilangnya banyak penduduk ini. Menurut informasi yang diterima Komisi, antara Agustus dan Desember 1983 paling tidak 28 orang dieksekusi atau dihilangkan di Subdistrik Iliomar dan 20 orang lain di dusun-dusun di Mehara. Eksekusi sering dilakukan di depan umum; dalam beberapa kasus yang dilaporkan ke Komisi, anggota pasukan keamanan memaksa penduduk desa membunuh sesama penduduk desa secara terbuka atau di pusat-pusat penahanan.

Pada tahun-tahun berikutnya penduduk sipil terus dieksekusi sebagai balasan atas serangan Falintil. Contoh-contoh termasuk pembunuhan penduduk sipil di Gariana (Maubara, Liquiçá) pada Januari 1995 setelah seorang tentara Falintil yang dikejar oleh pasukan ABRI lolos dan pembunuhan di Alas dan bagian lain di Distrik Manufahi setelah serangan dan eksekusi Falintil pada Oktober-November 1998.

1985-1998: iklim impunitas yang berlanjut

Pada periode 1985-1998 jumlah pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh ABRI dan kelompok binaannya menurun dibanding tahun-tahun pendudukan sebelumnya. Namun demikian, pasukan keamanan Indonesia tetap membunuh dan menyebabkan hilangnya penduduk sipil yang terbukti maupun dicurigai mempunyai hubungan baik dengan kelompok yang menentang pendudukan, termasuk anggota Fretilin/Falintil, jaringan klandestin dan kelompok prokemerdekaan lain.

Meskipun jumlah pelanggaran fatal turun, pelanggaran yang terjadi tidak bisa dianggap sebagai tindakan “oknum”. Iklim impunitas memungkinkan tindakan-tindakan seperti yang berikut ini terus terjadi dengan impunitas penuh sampai dekade 1990-an:

- Menembak ke arah masa demonstran yang tidak bersenjata, seperti dalam Makam Santa Cruz di Dili pada 12 November 1991
- Eksekusi dan penghilangan penduduk sipil sebagai balasan atas serangan dan eksekusi Falintil, seperti yang terjadi di Alas dan subdistrik lain di Manufahi pada Oktober-November 1998
- Eksekusi penduduk sipil sebagai pengganti petempur yang lolos, seperti di Gariana (Maubara, Liquiçá) pada Januari 1995
- Eksekusi penduduk sipil yang direkrut-paksa untuk ikut ambil bagian dalam operasi atau latihan militer selama aksi militer
- Menembak massa atau sekelompok orang yang tidak tahu-menahu yang melakukan kegiatan sehari-hari mereka, tanpa alasan jelas

Menanggapi tekanan internasional dan dalam negeri, militer Indonesia melakukan penyelidikan internal dan mengadakan proses pengadilan terhadap personel rendahan paling tidak dalam dua kasus, setelah Pembantaian Santa Cruz di Dili pada 1991 dan pembunuhan enam orang penduduk sipil di Gariana (Maubara, Liquiçá) pada 1995. Dalam kedua kasus tersebut proses hukum memberikan hukuman yang ringan kepada tentara berpangkat rendah, antara delapan bulan dan empat tahun. Komisi berkesimpulan bahwa proses hukum ini tidak dilaksanakan untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas kejahatan tersebut.

1999

Pada 1999 pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaan mereka melakukan kampanye kekerasan yang terkoordinasi dan berkepanjangan yang dirancang untuk mengintimidasi gerakan prokemerdekaan dan memastikan hasil yang pro-

Indonesia dalam Jajak Pendapat yang dilakukan PBB. Ribuan penduduk sipil ditahan, ratusan ribu dipaksa pindah, dan 1.400 – 1.500 dibunuh atau hilang selama tahun itu. Kebanyakan pelanggaran fatal terjadi pada April, sebelum penandatanganan Kesepakatan 5 Mei, dan pada September-Oktober, setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat.

Komisi berkesimpulan bahwa selama 1999, untuk melancarkan serangan terhadap penduduk sipil TNI jauh lebih banyak mengandalkan kelompok binaan Timor dibanding waktu-waktu sebelumnya, yang dalam hal ini berupa kelompok milisi yang bertindak sendiri. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi TNI untuk mendorong pemahaman bahwa kelompok milisi itulah yang bertindak sendiri, tapi bukan berarti bahwa TNI tidak bertanggung jawab secara langsung atas tindakan milisi, termasuk atas pembunuhan dan penghilangan yang mereka lakukan.

Komisi menerima bukti berlimpah bahwa selama 1999 TNI, polisi, dan kelompok milisi bertindak secara terkoordinasi. Basis militer secara terbuka digunakan sebagai markas milisi, dan perlengkapan militer, termasuk senjataapi, disebarkan kepada kelompok milisi. Beberapa personel TNI juga menjadi anggota atau komandan milisi. Petugas intel TNI memberikan daftar nama orang yang diinginkan, dan mengatur serangan. Penguasa sipil secara terbuka memberikan dana negara kepada kelompok milisi dan ikut terlibat dalam demonstrasi milisi dan kegiatan lain. Dan, Komisi berkesimpulan bahwa, dalam beberapa kejadian personel TNI terlibat langsung dengan milisi dalam serangan mematikan atau melancarkan serangan semacam ini sendiri. Contoh keterlibatan terang-terangan ini termasuk:

- Serangan di Gereja Liquiçá pada 6 April 1999, yang dilakukan oleh milisi Besi Merah Putih, dan pasukan Kodim serta Brimob setempat, di mana paling tidak 30-60 penduduk sipil tewas terbunuh.
- Pembunuhan balas dendam oleh milisi Halilintar dan personel TNI terhadap paling tidak 20 penduduk sipil pada hari-hari setelah adanya dugaan tentang pembunuhan seorang tentara TNI dan pemimpin pro-otonomi oleh Falintil di Subdistrik Cailaco (Bobonaro) pada 12 April 1999
- Serangan di Gereja Suai pada 6 September 1999 oleh milisi Laksaur dan pasukan keamanan Indonesia, di mana paling tidak 27 orang, termasuk tiga pastor, terbunuh.
- Serangan di Dili pada 5-6 September 1999 oleh milisi Aitarak dan pasukan keamanan Indonesia terhadap sejumlah bangunan dan kompleks di mana penduduk sipil mencari perlindungan, dan paling tidak 19 penduduk sipil terbunuh atau hilang.
- Serangan pada 8 September 1999 dan hari-hari berikutnya oleh Dadurus Merah Putih dan milisi-milisi lain, di bawah perintah pasukan keamanan Indonesia, terhadap orang-orang yang mencari perlindungan di kantor polisi Maliana (Bobonaro) dan kemudian terhadap orang-orang yang berhasil lolos dari kantor polisi, di mana paling tidak 26 penduduk sipil terbunuh atau hilang.

- Pada 12 September 1999, milisi Laksaur dan pasukan keamanan Indonesia, dalam upaya untuk secara paksa memindah penduduk dari desa Laktos, Fohorem (Covalima) membunuh 14 orang laki-laki yang menolak dipindah ke Timor Barat.
- Penembakan secara membabitnya oleh anggota Batalion 745 saat mereka menarik diri dari Lospalos (Lautém) ke Dili pada 21-22 September 1999, di mana paling tidak delapan orang terbunuh.
- Eksekusi terhadap 12 orang pada sekitar 20 Oktober 1999 oleh milisi Sakunar dan Aitarak serta pasukan keamanan Indonesia, saat mengumpulkan penduduk dari Desa Maquelab (Pante Makassar, Oecussi) untuk dibawa ke Timor Barat.

Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan

Pendahuluan

Komisi berkesimpulan bahwa selama periode invasi Indonesia pada 1975 sampai kedatangan pasukan perdamaian internasional pada akhir September 1999 anggota pasukan keamanan Indonesia menahan secara sewenang-wenang ribuan orang Timor dalam skala dan cara yang luas dan sistematis. Komisi juga berkesimpulan bahwa para tahanan secara rutin disiksa. Komisi menerima pernyataan dari para saksi dan korban yang melaporkan 20.779 kasus penahanan sewenang-wenang, 11.123 insiden penyiksaan, dan 8.436 insiden penganiayaan. Ribuan insiden penyiksaan dan penganiayaan dijelaskan oleh para saksi selama wawancara, dalam audiensi korban, audiensi rekonsiliasi komunitas, lokakarya profil komunitas, dan audiensi publik tematis yang dilaksanakan Komisi.

Gambaran yang muncul dari analisa mengenai informasi ini jelas dan sangat menguatkan. Komisi berkesimpulan bahwa ada kebijakan dan praktik sistematis di dalam lembaga pasukan keamanan Indonesia, sampai ke tingkat paling atas yang menyetujui dan mendorong digunakannya penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan orang Timor yang menentang secara politik invasi dan pendudukan Timor-Leste. Analisa dari semua kasus yang dilaporkan yang masuk ke dalam basis data Komisi menunjukkan bahwa penangkapan sewenang-wenang, penahanan, dan penyiksaan terjadi di semua distrik di Timor-Leste, meskipun yang paling sering terjadi di Dili dan jauh lebih sedikit di Oecussi, dan setiap tahun dari 1975 sampai 1999. Salah satu tantangan bagi pasukan keamanan Indonesia untuk menundukkan Resistansi adalah kurangnya pemahaman mengenai siapa yang aktif dalam gerakan klandestin prokemerdekaan. Satu taktik untuk mendapatkan informasi ialah dengan menahan secara sewenang-wenang orang-orang atau kelompok yang dicurigai mempunyai hubungan dengan gerakan kemerdekaan dalam bentuk apapun, atau mereka atau keluarganya tinggal di komunitas yang dicurigai prokemerdekaan. Mereka yang ditahan sering mengalami penyiksaan dan kekejaman yang ditujukan untuk mematahkan penolakan mereka untuk memberi informasi, atau untuk meyakinkan anggota keluarga aktivis untuk bekerjasama.

Kasus-kasus penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan ke Komisi, 1974-1999.

| Tabel 8 – Penahanan, 1974-1999 | | |
|--|---------------|-------------------|
| Pelaku | Jumlah | Persentase |
| Militer dan polisi Indonesia & kelompok binaan Timor | 20779 | 82,0 |
| Fretilin & Falintil | 3001 | 11,8 |
| UDT | 831 | 3,3 |
| Lembaga lain | 646 | 2,5 |
| Apodeti | 90 | 0,4 |
| Total | 25347 | 100,0 |

| Tabel 9 – Perincian kelompok pelaku: Penahanan, 1974-1999 | | |
|--|---------------|-------------------|
| Pelaku | Jumlah | Persentase |
| Militer dan polisi Indonesia yang bertindak sendiri | 12004 | 47,4 |
| Militer dan polisi Indonesia bersama kelompok binaan Timor | 5630 | 22,2 |
| Gerakan resistansi | 3128 | 12,3 |
| Kelompok binaan Timor yang bertindak sendiri | 3005 | 11,9 |
| Lembaga lain | 1399 | 5,5 |
| Penduduk sipil | 127 | 0,5 |
| Kelompok pro-otonomi | 54 | 0,2 |
| Total | 25347 | 100,0 |

| Tabel 10 – Penyiksaan dan penganiayaan, 1974-99 | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| Lembaga | Penyiksaan & Penganiayaan | |
| | Jumlah | % Bagian |
| Militer dan Polisi Indonesia bersama kelompok binaan Timor | 16135 | 82,4 |
| Fretilin | 1713 | 8,7 |
| Falintil | 419 | 2,1 |
| UDT | 730 | 3,7 |
| Apodeti | 63 | 0,3 |
| Lain-lain | 335 | 1,7 |
| Total | 19578 | 100,0 |

Tabel 11 – Perincian kelompok pelaku penyiksaan dan penganiayaan, 1974-99

| Lembaga | Penyiksaan & Penganiayaan | |
|--|---------------------------|--------------|
| | Jumlah | % Bagian |
| Militer dan Polisi Indonesia yang bertindak sendiri | 8890 | 45,4 |
| Kelompok Binaan Timor yang bertindak sendiri | 4380 | 22,4 |
| Militer dan Polisi Indonesia bersama Kelompok Binaan Timor | 2880 | 14,7 |
| Gerakan Resistansi | 2250 | 11,5 |
| Lain-lain | 747 | 3,8 |
| Penduduk Sipil | 509 | 2,6 |
| Kelompok Pro-otonomi | 157 | 0,8 |
| Tidak dilaporkan | 27 | 0,1 |
| Total | 19578 | 100,0 |

Penahanan sewenang-wenang

Dari 20.779 laporan khusus tentang penahanan sewenang-wenang oleh pasukan keamanan Indonesia yang dicatat Komisi, korban dilaporkan dijadikan sasaran penyiksaan dan penganiayaan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia dalam 19.559 kasus. Bukti berlimpah ini memberikan kepada Komisi gambaran yang tepercaya dan menguatkan tentang perlakuan kejam yang secara rutin dilakukan terhadap korban. Ribuan kasus ini, yang menjadi dasar temuan dalam segmen ini, memberikan kesaksian yang kuat dan konsisten tentang cara pelanggaran ini biasa dilakukan.

Penangkapan dan penahanan bersifat sewenang-wenang dari beberapa segi. Komisi tidak melihat satu kasus pun di mana orang yang ditangkap diberi tahu hak mereka, dan mereka jarang diberi tahu apakah mereka didakwa, atau mengapa mereka ditahan. Komisi tidak menerima satu kesaksian apapun tentang orang yang ditahan yang dibebaskan dengan jaminan. Kekerasan yang berlebihan, termasuk pemukulan berat, secara rutin digunakan selama penangkapan tertuduh. Dalam kebanyakan kasus bukti yang memberatkan tertuduh dalam kejahatan tidak ditunjukkan kepada mereka, dan mereka sering ditahan berdasar informasi yang diberikan informan. Karena tidak ada bukti nyata terhadap tertuduh mereka kemudian secara rutin disiksa untuk memaksa mereka mengaku atau memberi informasi.

Kondisi penahanan

Kondisi di mana para tahanan disekap sering menyedihkan. Tahanan sering meninggal karena kelaparan dan sakit karena tidak tersedianya air bersih di tempat penahanan mereka sampai pertengahan dekade 1980-an ketika jumlah tahanan berkurang dan rumah tahanan baru milik pemerintah mulai dibangun untuk menampung mereka yang ditahan. Bahkan setelah ini masih sering ada laporan

mengenai tahanan yang tidak diberi makanan selama beberapa hari atau diberi makan yang tidak layak untuk konsumsi manusia.

Kondisi di mana tahanan biasanya ditahan termasuk:

- Periode lama kelaparan berat di mana satu-satunya makanan yang diberikan adalah makanan yang secara sengaja tidak bisa dimakan, karena dicampur dengan pecahan kaca dan kotoran binatang, yang hangus, atau yang jelas sudah busuk.
- Memaksa tahanan telanjang untuk waktu yang lama. Di beberapa tempat penahanan praktiknya ialah memaksa tahanan telanjang atau hanya memakai celana dalam, untuk meningkatkan rasa malu dan kerentanan.
- Menyekap tahanan di sel isolasi untuk waktu yang lama, kadang sampai satu tahun, tanpa hubungan dengan manusia lain.
- Pusat penahanan, termasuk penjara, kantor polisi, dan markas komando militer, memiliki 'sel gelap' di mana tahanan disekap. Sel ini tidak mempunyai jendela, tidak ada sinar, dan berventilasi buruk.
- Tahanan sering disekap di sel kecil tanpa WC dan tidak diizinkan keluar sel, sehingga mereka terpaksa duduk di atas kotoran mereka sendiri atau kotoran tahanan lain. Ini juga terjadi di 'sel gelap'.

Kondisi menyedihkan ini sering muncul bersama. Korban memberikan kesaksian pribadi kepada Komisi tentang pengalaman mereka disekap sendirian dan dalam keadaan telanjang di 'sel gelap' yang kecil tanpa ada sinar samasekali, tanpa WC, dan dengan makanan yang dicampur kotoran dan air sabun sebagai satu-satunya sumber makanan mereka. Satu-satunya saat mereka dikeluarkan dari kondisi ini ialah saat disiksa dengan disetrum, dipukuli, dan bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Dalam banyak kasus kondisi tersebut diperpanjang, yang membuat tubuh korban perlahan-lahan dan dengan penuh kesakitan lunglai dan meninggal. Pasukan keamanan Indonesia secara sengaja menggunakan tempat-tempat tertentu sebagai pusat untuk interogasi dan penyiksaan, yang sebagian khusus digunakan untuk menyiksa korban. Sering korban dipindah-pindah ke sejumlah tempat ini dalam satu malam, dan menjalani interogasi dan penyiksaan di masing-masing tempat, untuk meningkatkan kebingungan, rasa keterasingan, dan kerentanan mereka. Sekali mereka ditahan, korban bisa dipindah-pindah dari satu unit intel ke unit lain untuk diinterogasi. Taktik ini digunakan secara rutin untuk meningkatkan rasa teror dan kerentanan korban.

Penyiksaan dan penganiayaan

Persamaan yang mencolok dalam perlakuan terhadap mereka yang disekap di tempat penahanan, di berbagai lokasi berbeda di wilayah ini dan selama periode 24 tahun penduduk, memberikan bukti tentang sifat pelanggaran yang berskala luas

.....
* Komisi menerbitkan buku mengenai audiensi publik ini, yang berisi kesaksian dan foto-foto audiensi, dan foto-foto sejarah [lihat *Political Imprisonment CAVR National Public Hearing (Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Tahanan Politik) 17-18 Februari 2003*]

dan sistematis dan fakta bahwa pelanggaran ini secara kelembagaan ditoleransi dan didorong. Hal ini juga menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pasukan keamanan Indonesia menerapkan praktik-praktik ini sebagai bagian dasar operasi mereka di Timor-Leste. Komisi berkesimpulan bahwa penggunaan secara sistematis penyiksaan oleh pasukan keamanan Indonesia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penyiksaan merupakan pelanggaran hak petempur maupun penduduk sipil. Komisi menerima laporan tentang penyiksaan terhadap pejuang Falintil oleh anggota pasukan keamanan Indonesia. Namun demikian Komisi menerima laporan yang jauh lebih banyak tentang penyiksaan penduduk sipil yang tidak menjadi bagian dari oposisi bersenjata.

Keseluruhan bukti yang dipertimbangkan oleh Komisi mendorong Komisi untuk menarik kesimpulan bahwa tujuan penggunaan penyiksaan secara sistematis adalah:

- Untuk mencoba memaksa penduduk sipil memberi informasi mengenai orang lain yang mungkin terlibat dalam menentang pendudukan
- Untuk menunjukkan hukuman yang kejam yang akan diberikan kepada siapa saja yang menentang pendudukan
- Untuk menunjukkan bahwa anggota pasukan keamanan Indonesia bisa bertindak secara sewenang-wenang dan dengan impunitas penuh terhadap penduduk Timor
- Untuk menunjukkan bahwa rakyat Timor berada dalam situasi yang sepenuhnya takluk, rentan, dan lemah tanpa bisa membela hak asasi dan martabat mereka, dan karena itu mereka harus menerima pendudukan
- Untuk menciptakan kondisi teror yang mendalam di antara penduduk untuk memaksa mereka agar tidak menentang pendudukan.

Dalam kasus orang yang akan dibawa ke pengadilan, pengakuan tertulis sering disiapkan sebelum interogasi terhadap tertuduh dimulai. Tertuduh dipaksa menandatangani pengakuan dengan cara disiksa selama interogasi.

Selain siksaan fisik, juga dipakai cara lain seperti ancaman pembunuhan terhadap korban dan keluarga mereka, larangan tidur, atau tidak diberikan makanan, air, dan fasilitas kesehatan. Sering interogasi berlangsung terus-menerus selama beberapa hari untuk mematahkan semangat korban.

Bentuk-bentuk penyiksaan

Jenis-jenis penyiksaan yang dilaporkan korban dan saksi kepada Komisi mempunyai kesamaan yang mencolok.

Berdasar pengakuan yang luas Komisi percaya bahwa tindakan-tindakan penyiksaan dan kekejaman lain, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan umumnya dipakai oleh pasukan keamanan Indonesia:

- Memukul dengan tangan atau alat seperti kayu atau ranting, pipa besi, gagang senapan, rantai, palu, sabuk, atau kabel listrik

- Menendang, biasanya oleh penyiksa yang memakai sepatu tentara atau polisi, termasuk di sekitar kepala dan wajah
- Memukul dan menampar
- Mencambuk
- Menyayat dengan pisau
- Jari kaki korban diletakkan di bawah kaki kursi atau meja dan satu orang atau lebih duduk atau melompat ke kursi atau meja
- Menyundut tubuh korban dengan rokok atau korek gas, termasuk alat kelamin
- Menggunakan setrum ke bagian tubuh korban yang paling sensitif, termasuk alat kelamin
- Mengikat tangan dan kaki korban dan menggantung korban di pohon atau atap
- Menggunakan air dengan berbagai cara, termasuk membenamkan kepala korban di air; memasukkan korban ke tong yang penuh air dalam jangka waktu lama, kadang sampai tiga hari; membasahi dan melunakkan kulit korban dengan air sebelum memukuli; menuang air yang sangat panas atau air yang sangat dingin ke tubuh korban; menuang air yang sangat kotor atau air comberan ke tubuh korban
- Pelecehan seksual, bentuk-bentuk penyiksaan dan penganiayaan secara seksual, atau perkosaan dalam tahanan. Perempuan merupakan korban utama pelecehan yang meluas ini
- Memotong satu atau kedua telinga korban untuk menandai korban sebagai pendukung Resistansi
- Mengikat korban di belakang mobil dan memaksa korban berlari mengejar mobil atau diseret di tanah, kadang sampai korban meninggal
- Meletakkan kadal dengan gigi dan kuku tajam di atas korban dan kemudian mengarahkan kadal tersebut untuk menggigit bagian-bagian tubuh korban yang berbeda
- Menarik kuku jari tangan dan kaki dengan tang
- Melindas korban dengan sepeda motor
- Memaksa korban minum air kencing tentara atau makan bahan-bahan yang tidak layak dimakan seperti cicak hidup atau kaus kaki kotor
- Memanggang korban di terik matahari untuk jangka waktu yang lama
- Mempermalukan tahanan di depan masyarakat setempat, misalnya dengan memaksa mereka berdiri, ditelanjangi, kemudian berjalan telanjang keliling kota
- Menyiksa dan memperlakukan dengan tidak baik anggota keluarga korban di depan mereka, termasuk anak-anak mereka

Selain cara-cara di atas, di mana setiap pelanggaran dilaporkan terjadi di beberapa kasus, Komisi menerima laporan langsung dari korban mengenai berbagai bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi lainnya. Cara penyiksaan berikut dilaporkan oleh korban:

- Menggosokkan cabai ke mata korban
- Memaksa korban membawa kepala yang dipenggal keliling desa
- Memukuli dua orang korban laki-laki yang telah ditelanjangi, sementara alat kelamin mereka diikat bersama dengan kabel
- Memotong telinga korban dan memaksa korban memakan telinganya sendiri
- Mengikat korban di dalam kantong penuh dengan ular
- Menyiram sekelompok tahanan dengan bensin dan mengancam akan membakar mereka hidup-hidup
- Mengikat korban di dalam kantong dan membakar hidup-hidup

Selain penganiayaan fisik, tahanan juga mengalami penyiksaan mental dan emosional serta perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan. Cara-cara yang sering dipakai termasuk:

- Menyekap tahanan dalam jangka waktu yang tidak terbatas tanpa bisa berhubungan dengan keluarga atau teman
- Menyekap tahanan dalam sel isolasi dalam jangka waktu yang panjang atau di sel tanpa sinar dan ventilasi
- Membawa tahanan ke tempat-tempat yang dipakai untuk eksekusi tanpa proses hukum dan berpura-pura kepada korban bahwa mereka akan dibunuh, bahkan sampai menembakkan senjata ke arah korban
- Mencerca korban dan memaki-maki
- Memaksa korban saling memukul
- Menyiksa anggota keluarga di ruang sebelah agar korban bisa mendengar teriakan mereka, atau menyiksa atau mengancam akan menyiksa anggota keluarga di depan korban
- Menutup mata atau memasang kain hitam, helm, atau ember di kepala korban selama interogasi dan penyiksaan
- Menggunakan simbolisme untuk mempermalukan dan mematahkan semangat korban, seperti memukul tahanan dengan bendera Portugis atau Fretilin, atau mengikat korban di tiang bendera Indonesia
- Menghina agama korban dengan mematahkan kayu salib korban atau mengikat korban ke kayu salib
- Sekelompok orang yang menginterogasi meludah ke korban

Perkosaan, perbudakan seksual, dan pelanggaran seksual lainnya

Komisi berkesimpulan bahwa selama periode invasi dan pendudukan Timor-Leste, anggota pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaan mereka terlibat dalam perkosaan, penyiksaan seksual, dan tindakan kekerasan seksual lainnya dalam skala luas dan sistematis terhadap perempuan Timor, yang merupakan tidak kejahatan terhadap kemanusiaan.

Komisi mendasarkan temuan ini pada pertimbangan kesaksian lebih daripada 850 korban atau saksi perkosaan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Kebanyakan bukti yang berkaitan dengan perkosaan, perbudakan seksual, dan pelanggaran seksual lainnya diberikan selama wawancara mendalam dengan korban. Wawancara-wawancara ini dilakukan dengan kerjasama dari LSM hak perempuan Fokupers karena keahlian serta pengalaman mereka dalam berhubungan dengan korban perempuan dari kekerasan seksual.

Komisi yakin bahwa bukti dari korban sangat tepercaya dan menyentuh, karena bukti tersebut diberikan meskipun mengandung risiko pribadi dan emosional dalam menceritakan pengalaman yang keji tersebut dan karena dengan pembeberan bukti tersebut bisa menimbulkan stigma sosial bagi korban.

Komisi juga yakin mengenai kemungkinan bahwa karena adanya konsekuensi pribadi dan sosial, banyak korban lain yang mengalami penderitaan yang sama tidak mau tampil dan menceritakan pengalaman mereka kepada Komisi. Berdasar wawancara yang dilakukan Komisi, kemungkinan adanya laporan yang jumlahnya jauh lebih kecil dibanding jumlah korban sebenarnya, pola perkosaan yang berskala luas dan sistematis yang sudah terbukti dan dilakukan secara terbuka serta dengan impunitas, Komisi berkesimpulan bahwa lebih daripada 850 korban dan saksi yang memberikan kesaksian mewakili jumlah korban yang jauh lebih banyak yang tidak mau tampil.

Laporan sebenarnya tentang kasus-kasus pelanggaran seksual yang dilaporkan langsung oleh korban dan saksi kepada Komisi dirangkum dalam tabel-tabel berikut.

Pelanggaran seksual 1974-1999

| Tabel 12 - Pelanggaran seksual, 1974-1999 | | |
|--|------------|--------------|
| Pelaku | Jumlah | Persentase |
| Militer dan polisi Indonesia & kelompok binaan Timor | 796 | 93,3 |
| Lembaga lain | 29 | 3,4 |
| Fretilin & Falintil | 27 | 3,2 |
| UDT | 1 | 0,1 |
| Total | 853 | 100,0 |

Tabel 13 – Perincian kelompok pelaku: pelanggaran seksual, 1974-1999

| Pelaku | Jumlah | Persentase |
|--|------------|--------------|
| Militer dan polisi Indonesia yang bertindak sendiri | 518 | 60,7 |
| Kelompok binaan Timor yang bertindak sendiri | 184 | 21,6 |
| Militer dan polisi Indonesia bersama kelompok binaan Timor | 89 | 10,4 |
| Gerakan resistansi | 28 | 3,3 |
| Lembaga lain | 27 | 3,2 |
| Penduduk sipil | 7 | 0,8 |
| Total | 853 | 100,0 |

Kekerasan seksual di dalam instalasi militer Indonesia

Berdasar ratusan kesaksian langsung dari korban, Komisi berkesimpulan bahwa tindakan-tindakan berikut yang sarasannya perempuan Timor terjadi di instalasi resmi militer Indonesia:

- Perkosaan secara berulang-ulang tahanan perempuan oleh beberapa anggota pasukan keamanan Indonesia. Dalam beberapa kasus korban perempuan menyatakan bahwa mereka tidak bisa menghitung jumlah pelaku yang memerkosa mereka. Korban yang memberikan kesaksian di Audiensi Publik Nasional Komisi tentang Perempuan dan Konflik menyatakan bahwa mereka diperkosa oleh tentara yang berbeda setiap hari selama berbulan-bulan dalam tahanan.
- Perkosaan kelompok oleh anggota pasukan keamanan Indonesia baik di luar maupun di dalam instalasi militer resmi.
- Perkosaan terhadap perempuan yang tangan dan kakinya diborgol dan matanya ditutup. Dalam beberapa kasus perempuan yang diikat dengan cara ini diperkosa sampai mereka tidak sadar.
- Mutilasi alat kelamin perempuan, termasuk memotong dengan pisau, memasukkan kayu dan bayonet ke vagina, dan menyundut puting dan alat kelamin dengan rokok.
- Menggunakan setrum ke alat kelamin, payudara, dan mulut.
- Memaksa tahanan melakukan hubungan seksual di antara mereka, sambil dilihat dan ditertawakan oleh anggota pasukan keamanan.
- Praktik umum menyimpan daftar perempuan setempat yang bisa disuruh datang ke pos atau markas militer agar tentara bisa memerkosa mereka. Daftar ini saling ditukar antarkomandan. Dalam beberapa kasus para perempuan tersebut disuruh datang ke pos militer setiap pagi untuk diperkosa oleh anggota pasukan keamanan Indonesia.

- Perkosaan terhadap tahanan terjadi setelah penyiksaan dalam jangka waktu yang lama.
- Perkosaan perempuan hamil. Komisi menerima banyak bukti mengenai hal ini, termasuk satu kesaksian di mana seorang perempuan diperkosa beberapa jam sebelum melahirkan.
- Memaksa korban telanjang atau memerkosanya di depan orang yang tidak dikenal, teman, dan keluarga. Dalam satu kasus seorang perempuan diperkosa di depan ibunya dan kemudian dibunuh. Lebih sering korban diperkosa dan disiksa di depan anak-anaknya.
- Perempuan diperkosa di depan tahanan lain sebagai cara untuk menyorot korban dan tahanan lain.
- Memasukkan perempuan ke dalam tong air untuk jangka waktu yang lama, termasuk membenamkan kepala mereka, sebelum diperkosa.
- Memakai ular untuk menyorot perempuan yang telanjang selama penyiksaan seksual.
- Ancaman terhadap perempuan bahwa anak-anak mereka akan dibunuh atau disiksa kalau mereka menentang atau mengeluh tentang perkosaan mereka.
- Memasukkan barang seperti baterai besar ke vagina atau dubur perempuan.
- Memasukkan senjata dan bayonet ke vagina atau dubur orang.
- Memaksa seks oral, yang merupakan perkosaan.
- Kencing di mulut korban.
- Perkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan tanpa pandang bulu dengan korban perempuan menikah, perempuan lajang, dan anak gadis.

Jumlah perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya terkait dengan pola dan intensitas kegiatan militer pada waktu tertentu. Pelanggaran seksual meningkat drastis pada saat operasi militer besar, dan menurun saat operasi militer jarang terjadi. Misalnya, 64% perbudakan seksual yang dilaporkan ke Komisi terjadi selama periode operasi militer Indonesia secara besar-besaran.

Perkosaan perempuan yang menyerah atau ditangkap

Perempuan yang menyerah atau ditangkap oleh pasukan keamanan Indonesia dalam kaitannya dengan kegiatan resistansi terutama sangat rentan terhadap perkosaan dan penyiksaan seksual. Penangkapan massal setelah pemberontakan sipil antara 1981 dan 1983 menyebabkan naiknya jumlah perempuan yang diperkosa atau dipaksa menjadi budak seksual oleh anggota pasukan keamanan Indonesia.

Perempuan yang menyerah dipaksa terlibat dalam operasi militer, biasanya untuk memasak atau melakukan tugas lain. Dalam beberapa kasus, perempuan dijadikan sasaran penyiksaan, perkosaan, dan perbudakan seksual selama keterlibatan mereka dalam operasi militer.

Perempuan merupakan bagian dari ribuan penduduk sipil Timor yang dipaksa menjadi Hansip dan disuruh berpatroli keliling desa. Selama patroli semacam ini, yang diawasi oleh anggota pasukan keamanan Indonesia bersenjata, perempuan umumnya diperkosa dan dilecehkan.

Kekerasan berskala besar sepanjang 1999 mengakibatkan peningkatan pesat jumlah perempuan yang diperkosa. Mereka yang dipindahkan atau menjadi pengungsi terutama sangat rentan. Tindakan kekerasan seksual semacam ini dilakukan oleh anggota kelompok milisi, TNI, atau dalam beberapa hal kedua kelompok pelaku tersebut bersama-sama.

Perbudakan seksual

Selama pendudukan sudah menjadi praktik umum bahwa anggota pasukan keamanan Indonesia memaksa perempuan Timor menjadi budak seksual. Kegiatan semacam ini dilakukan secara terbuka, tanpa takut dimintai pertanggungjawaban, di instalasi militer, di tempat-tempat resmi lain, dan di rumah para perempuan yang menjadi sasaran sering di depan orangtua, anak-anak, dan anggota keluarga lain.

Sudah menjadi praktik umum bahwa pasukan keamanan Indonesia memaksa menyekap tahanan perempuan Timor di markas militer tanpa tujuan militer yang jelas. Para perempuan tersebut, yang kadang ditahan selama beberapa bulan dan kadang bertahun-tahun, sering diperkosa setiap hari atau diminta oleh perwira yang menguasai mereka, serta oleh tentara lain yang melihat mereka sebagai sasaran mudah. Selain itu mereka dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga.

Korban dari bentuk perbudakan seksual semacam ini tidak bebas bergerak atau bepergian, atau bertindak secara mandiri apapun alasannya. Secara umum “hak milik” atas para perempuan ini dialihkan dari perwira yang menyelesaikan tugasnya kepada penggantinya atau perwira lain. Dalam beberapa situasi perempuan yang dipaksa menjalani situasi demikian menjadi hamil dan melahirkan anak beberapa kali dengan perwira yang berbeda selama bertahun-tahun mereka menjadi budak seksual.

Secara umum perwira Indonesia yang bertanggung jawab menjadi ayah dari anak-anak ini melalui perkosaan atau perbudakan seksual tidak menerima tanggung jawab atas kesejahteraan material anak-anak mereka.

Impunitas bagi pelaku perkosaan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual

Praktik menandatangani, memerkosa, dan menyiksa perempuan dilakukan secara terbuka, tanpa takut hukuman apapun, oleh perwira militer senior, pejabat sipil, perwira/pejabat muda, perwira polisi, guru, dan anggota kelompok binaan seperti Hansip dan milisi. Bila korban kekerasan seksual atau orang yang mewakili keluarga mereka mengeluh kepada pengadilan tentang apa yang terjadi, permintaan bantuan mereka biasanya ditanggapi dengan sangkalan dan agresi. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga yang mengeluh dipukuli atau dihukum karena mengeluh.

Keterlibatan dalam dan penerimaan praktik-praktik semacam ini oleh komandan militer dan pejabat sipil, pengetahuan umum bahwa perkosaan dan penyiksaan seksual disetujui secara resmi, pemakaian fasilitas militer dan resmi untuk tujuan tersebut, dan impunitas bagi pelaku menciptakan situasi di mana praktik tersebut bisa dilakukan oleh anggota pasukan keamanan kapan saja. Ini meningkatkan jumlah kekerasan seksual pada tahun-tahun setelah invasi, dan merembet ke perwira yang lebih rendah pangkatnya serta anggota kelompok binaan seperti Hansip dan milisi, yang melakukan tindakan mereka di bawah pengawasan dan perlindungan pasukan keamanan. Dalam beberapa kasus anggota Hansip atau pejabat sipil berpangkat rendah akan secara paksa mendatangkan perempuan dan memberikan mereka kepada komandan militer dengan imbalan kenaikan status dan imbalan.

Skala dan sifat pelanggaran yang dilakukan dan impunitas total pelaku dari semua tingkatan sudah menjadi pengetahuan umum di semua tingkatan pasukan keamanan dan penguasa sipil selama pendudukan. Mereka tidak bisa menikmati impunitas ini tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota senior pasukan keamanan Indonesia, polisi dan penguasa sipil.

Perwira polisi juga terlibat dalam penyiksaan dan perkosaan, tetapi jauh lebih sedikit dibanding personel militer. Perwira polisi mempunyai impunitas yang sama secara umum dengan anggota pasukan keamanan Indonesia untuk pelanggaran seksual.

Insiden di mana anggota pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam perkosaan penduduk laki-laki, termasuk seks oral secara paksa, dan dalam pelanggaran seksual lainnya terhadap tahanan laki-laki Timor dan penduduk sipil lain, juga terjadi. Insiden jenis pelanggaran ini jauh lebih jarang dibanding yang dilakukan terhadap perempuan Timor.

Dalam kesaksiannya di hadapan Komisi, mantan Gubernur Timor Timur, Mário Carrascalão, menyatakan bahwa sudah diterima di antara komandan militer dan pejabat pemerintah bahwa mereka bisa memerkosa perempuan muda Timor kapan saja, dan bahwa perempuan digilir dari satu komandan dan pejabat pemerintah ke komandan dan pejabat lain. Dia menceritakan kejadian di mana komandan militer senior meminta dia memilih di antara para perempuan muda yang menghadiri acara resmi dan membawa mereka pergi dan memerkosa mereka seandainya dia mau. Dia menolak ajakan tersebut. Mário Carrascalão menyatakan bahwa perilaku semacam ini umum dan diterima secara kelembagaan.⁶

Dalam banyak kasus, personel militer Indonesia mengancam akan membunuh dan menyiksa anggota keluarga lain atau masyarakat apabila perempuan yang mereka incar tidak mau dijadikan budak seksual. Dalam kasus semacam ini wakil masyarakat dan anggota keluarga dihadapkan pada pilihan yang sulit antara membiarkan perempuan tersebut diperkosa, dan menanggung konsekuensi yang lebih menyedihkan, seperti penyiksaan dan pembunuhan anggota keluarga lain, apabila mereka menolak.

Tanggung jawab atas kelaparan dan pemindahan selama dekade 1970-an dan 1980-an

Pendahuluan

Komisi berkesimpulan bahwa selama akhir dekade 1970-an dan awal dekade 1980-an, pemindahan massal penduduk sipil terjadi di wilayah Timor-Leste. Ini merupakan faktor utama yang menimbulkan kelaparan dan kematian karena kekurangan pangan di antara lebih daripada 100.000 rakyat Timor.

Komisi berkesimpulan bahwa selama akhir dekade 1970-an pasukan keamanan Indonesia menerapkan strategi yang memiliki unsur-unsur berikut:

- Pengeboman berat dari darat, laut, dan udara di daerah-daerah di mana anggota Resistansi dan penduduk sipil yang bersama mereka diperkirakan tinggal
- Penghancuran sumber bahan makan
- Memaksa orang-orang yang tertangkap atau menyerah setelah tinggal di daerah yang dikuasai Fretilin untuk mendiami tempat-tempat permukiman dan daerah-daerah yang diawasi militer
- Tidak memberikan makanan yang memadai kepada orang-orang ini untuk bertahan hidup
- Secara paksa tidak mengizinkan mereka bergerak bebas untuk mencari makan
- Menolak permintaan yang sudah dilakukan berulang-ulang agar lembaga bantuan internasional diizinkan memberikan bantuan makanan kepada orang-orang yang kelaparan

Ini merupakan unsur dari suatu strategi yang mengakibatkan kematian puluhan ribu penduduk sipil Timor.

Komisi percaya bahwa dengan menerapkan strategi ini Indonesia melanggar banyak kewajibannya sesuai hukum humaniter internasional dan negara Indonesia bertanggung jawab atas kematian penduduk sipil ini. Komisi juga percaya bahwa anggota angkatan bersenjata Indonesia dan pejabat sipil melakukan tindak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang menyebabkan kelaparan dan kematian massal.

Tanggung jawab atas pemindahan massal penduduk sipil

Pada awal invasi Timor-Leste pada 1975 dan awal 1976, ribuan penduduk sipil melarikan diri dari rumah mereka untuk menghindari kedatangan militer Indonesia baik yang nyata maupun yang diperkirakan. Lebih banyak orang Timor melarikan diri setelah pasukan Indonesia bergerak ke daerah-daerah lain di wilayah ini. Komisi berkesimpulan bahwa teror di antara penduduk sipil muncul tidak hanya dari invasi itu sendiri, tetapi juga dari berita mengenai pembantaian dan eksekusi yang dilakukan oleh ABRI dan penggunaan kekerasan yang sangat berlebihan yang diarahkan kepada resistansi bersenjata dan penduduk sipil tanpa pandang bulu.

Dalam konteks ini bisa dipahami bahwa penduduk sipil Timor dalam jumlah yang banyak melarikan diri dari invasi.

Komisi percaya bahwa Indonesia harus bertanggung jawab atas pemindahan massal yang terjadi karena invasi dan pendudukan wilayah Timor secara bertahap. Pemindahan penduduk dalam jumlah yang banyak merupakan konsekuensi langsung dan yang bisa diperkirakan sebelumnya dari cara perang yang digunakan ABRI, termasuk serangan-serangan ABRI terhadap penduduk sipil.

Banyak penduduk sipil yang lari dari rumah mereka pada awal invasi dan mencari perlindungan di wilayah-wilayah basis Fretilin dijadikan sasaran dari sebuah proses yang terjadi sebelumnya saat basis-basis tersebut dijadikan sasaran oleh pasukan Indonesia, sering dengan menggunakan bentuk serangan yang sangat berlebihan dan tidak pandang bulu. Selama periode ini para pemimpin Fretilin memaksa para pengikutnya tidak menyerah kepada penguasa Indonesia, dan mereka memikul tanggung jawab atas dampak dari tindakan mereka. Banyak orang yang tinggal di gunung, bersembunyi dari pasukan Indonesia, meninggal karena kelaparan dan penyakit. Melihat dari apa yang terjadi kepada mereka yang telah menyerah sebelumnya dan perlakuan mereka saat mereka akhirnya menyerah, tidak jelas apakah mereka akan bernasib lebih baik apabila menyerah.

Komisi berkesimpulan bahwa ketika penduduk sipil meninggalkan wilayah yang dilindungi Falintil dan “menyerah” kepada pasukan Indonesia mereka pada umumnya dipaksa menempati kamp-kamp dan tempat-tempat permukiman yang dijaga ketat dalam upaya untuk mencegah mereka berhubungan atau melakukan kontak dengan Resistansi. Banyak yang dipaksa tinggal di kamp-kamp tersebut selama beberapa tahun. Penjagaan sangat ketat, terutama di wilayah di mana pasukan Falintil dicurigai beroperasi, dan orang-orang dilarang bepergian, kecuali hanya di daerah-daerah dekat kamp. Karena itu, mereka tidak bisa mencari makan.

Dari awal dekade 1980-an penguasa Indonesia memperkenalkan bentuk baru pemindahan penduduk. Pada satu sisi mereka membongkar sebagian besar kamp-kamp permukiman yang didirikan pada akhir dekade 1970-an; pada sisi lain mereka menghadapi kenyataan bahwa Resistansi yang telah direorganisasi sekarang mampu melancarkan serangan lokal terhadap ABRI, sering dengan dukungan klandestin dari desa-desa.

Mereka yang dibawa keluar dari kamp permukiman dikirim ke desa-desa strategis yang dijaga ketat militer, ke desa-desa baru, sering di daerah tidak subur yang tak mampu mendukung kehidupan mereka, ke desa asal mereka, atau terutama kalau mereka mempunyai saudara yang masih bersama dengan Resistansi, ke Pulau Ataúro. Dalam semua situasi ini, hidup tetap sulit. Setiap aspek dari program tersebut masih tetap dilandasi oleh tujuan militer. Bahkan mereka yang dimukimkan di wilayah subur menyadari bahwa pembatasan kebebasan gerak mereka tetap berdampak pada produksi pangan mereka dan karena itu juga pada kesejahteraan mereka. Bagi mereka yang ditahan di Ataúro, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, hidup di pulau kering sulit, terutama pada tahun-tahun awal sebelum ICRC diizinkan beroperasi di sana, dan banyak yang meninggal.

Selain memindahkan orang dari kamp permukiman, penguasa Indonesia juga memindahkan orang yang ditengarai punya hubungan tertentu dengan serangan dan pemberontakan yang dipimpin Falintil, seperti di Mau Chiga (Hatu Builico, Ainaro) dan Rotuto (Same, Manufahi) sekitar Gunung Kablaki pada Agustus 1982 serta *levantamentos* di Kraras (Viqueque) dan Distrik Lautém pada Agustus 1983. Pemandahan ini merupakan hukuman kolektif dan hukuman terhadap anggota keluarga dekat dari orang-orang yang masih berperang di hutan dan gunung. Beberapa orang yang ditahan dalam keadaan tersebut juga dikirim ke Ataúro. Orang-orang lain dipindah dari desa-desa mereka ke daerah-daerah di mana mereka harus membangun kembali hidup mereka di lingkungan yang tidak bersahabat tanpa bantuan apapun. Ini merupakan nasib banyak penduduk desa-desa di Ainaro dan Manufahi yang terlibat dalam pemberontakan Kablaki pada Agustus 1982 dan kebanyakan korban perempuan yang masih hidup dari eksekusi massal yang terjadi setelah pemberontakan Kraras (Viqueque) pada Agustus 1983. Kelompok ini kemudian dikirim ke tempat-tempat yang belum pernah dihuni di Lalerek Mutin, di mana mereka dibiarkan bertahan hidup sendiri di bawah pengawasan ketat militer. Penduduk Lalerek Mutin mengalami pelanggaran seksual, penghilangan, kelaparan, penyakit, dan kematian di sana. Perlakuan terhadap mereka sangat mirip dengan perlakuan terhadap penduduk Ainaro yang dipindah ke desa Raifusa dan Dotik tahun sebelumnya.

Tanggung jawab atas berbagai bentuk pemindahan ini dan dampaknya harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia yang merancang dan menerapkan kebijakan ini. Komisi menolak saran apapun bahwa hal ini dilakukan untuk kepentingan atau perlindungan penduduk sipil. Dokumen militer Indonesia menunjukkan bahwa tujuan utamanya ialah mencegah pejuang Resistansi mendapat dukungan dari penduduk setempat (lihat Bab 7.3.: Pemindahan paksa dan kelaparan). Selain itu, pemindahan ditujukan untuk memperlemah semangat penduduk untuk menentang pendudukan dan untuk memindahkan penduduk sipil ke tempat-tempat di mana mereka bisa diawasi dengan lebih mudah. Cara pemindahan ini dilakukan mendorong Komisi menyimpulkan bahwa dampak dari pemindahan pada kesejahteraan mereka yang dipindahkan tidak dihiraukan oleh pasukan militer Indonesia. Perhatian utama mereka hanya untuk menghancurkan Resistansi dengan menghilangkan basis dukungan tanpa memedulikan jumlah nyawa manusia.

Komisi berkesimpulan bahwa penguasa militer dan sipil Indonesia bertanggung jawab atas pemindahan paksa ratusan ribu penduduk sipil Timor selama akhir dekade 1970-an dan awal dekade 1980-an dan karena itu harus mempertanggungjawabkan konsekuensi dari tindakan mereka yang sebenarnya bisa diperhitungkan saat itu.

Tanggung jawab atas kelaparan dan kematian dengan tidak menelantarkan

Dari 1976 sampai 1978 angkatan bersenjata Indonesia secara sistematis menghancurkan tanaman pangan, persediaan pangan, alat-alat pertanian, kebun dan sawah, dan ternak milik penduduk Timor yang melarikan diri dari rumah

dan desa mereka. Komisi menerima ratusan kesaksian yang konsisten dari saksi yang menceritakan bahwa sawah mereka dibakar oleh tentara Indonesia, ternak dibantai, persediaan makanan dibakar, sumber air diracun, dan sumber makanan di hutan dihancurkan.

Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghukum mereka yang dicurigai mendukung Resistansi, memaksa penduduk yang bergantung pada makanan tersebut untuk pindah ke daerah-daerah di mana mereka bisa diawasi, dan menjamin agar makanan tidak tersedia untuk Resistansi.

Antara akhir 1977 dan akhir 1978 dampak dari pemindahan sebagian besar penduduk Timor dari rumah mereka dan penghancuran sumber makanan, serta kampanye pengeboman yang menghambat mereka menanam tanaman pangan di pedalaman tempat mereka mencari perlindungan dari tentara invasi, menciptakan situasi kelaparan. Kematian muncul karena kelaparan dan kelemahan fisik mulai terjadi dalam skala besar di antara mereka yang dipindahkan. Kondisi semacam ini terutama terjadi pada orang-orang yang selalu bergerak karena selalu dikejar tentara Indonesia dan di antara mereka yang digiring dalam jumlah besar ke wilayah-wilayah yang dikelilingi oleh pasukan Indonesia sehingga tidak memungkinkan pergerakan mereka, bahkan untuk mencari makan.

Komisi sudah meneliti catatan curah hujan dan data-data iklim lainnya untuk melihat apakah ada dampak El Niño yang bisa menyebabkan kekurangan makan pada waktu tersebut. Data-data ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak ada fluktuasi yang besar dalam hal curah hujan yang menyebabkan kekeringan hebat. Jelas bagi Komisi bahwa kelaparan merupakan akibat langsung kebijakan dan kegiatan militer Indonesia, dan tidak disebabkan oleh kekeringan atau kondisi lain karena alam.

Orang-orang yang kelaparan dihadapkan pada pilihan mustahil antara kelaparan di wilayah-wilayah ini atau menyerahkan diri kepada pasukan yang mereka tahu akan menyiksa dan membunuh banyak orang yang memercayakan keselamatan mereka kepada pasukan ini. Akhirnya banyak yang memilih menyerah, tetapi setelah puluhan ribu dari mereka meninggal.

Puluhan ribu orang yang dipaksa pindah, atau yang turun dari gunung dan hutan untuk menyerah kepada pasukan Indonesia, ditempatkan di kamp-kamp yang dijaga dan tempat-tempat tertutup yang diawasi militer. Sifat utama dari kamp-kamp ini ialah kekurangan makanan bagi tahanan untuk hidup dan larangan bagi tahanan untuk bergerak mencari makanan.

Sudah dalam kondisi lemah saat mereka tiba di kamp-kamp, tahanan bertahan selama jangka waktu yang lama tanpa kebun makanan atau bantuan kemanusiaan darurat. Makanan yang mereka terima dari militer samasekali tidak mencukupi untuk bertahan hidup. Makanan juga sering tidak sesuai untuk orang yang menderita malnutrisi berat. Bahkan ransum yang sedikit yang diberikan militer kepada tahanan di kamp-kamp dibagi-bagikan secara diskriminatif. Sebagai imbalan atas makanan yang diberikan militer dan kelompok binaan mereka minta uang, perhiasan keluarga dan barang-barang lain, serta seks.

Laporan mengenai kelaparan mulai mencapai lembaga bantuan darurat internasional pada awal 1977, yang mendorong seruan oleh lembaga tersebut kepada pemerintah Indonesia untuk mengizinkan mereka memasuki wilayah tersebut. Kunjungan tingkat tinggi oleh sembilan duta besar pada September 1978 ke kamp-kamp permukiman di Timor-Leste meningkatkan kesadaran internasional akan kebutuhan besar program bantuan darurat. Pemerintah Indonesia tetap menolak permintaan lembaga bantuan internasional untuk menyediakan makanan kepada mereka yang kelaparan sampai meninggal.

Skala kelaparan pada pertengahan dan akhir 1979 dan fakta bahwa kelaparan ini memburuk dengan cepat bisa dilihat dari laporan lembaga internasional saat itu. Misalnya, sebagai hasil survei pada April 1979 lembaga Catholic Relief Services dari Amerika Serikat memperkirakan bahwa 200.000 orang dalam “keadaan kekurangan gizi berat”. Pada September 1979 lembaga ini menemukan bahwa jumlah orang yang mengalami kondisi ini hampir mencapai 300.000. Palang Merah Internasional (ICRC) menggambarkan bahwa 60.000 dari 75.000 orang yang disurvei pada Juli 1979 berada pada “keadaan kurang gizi yang mengkhawatirkan” termasuk “20.000 yang meninggal karena kelaparan”.

Pemerintah Indonesia menolak memberi izin kepada lembaga bantuan kemanusiaan internasional untuk melakukan kegiatan di Timor-Leste sejak hari invasi pada 7 Desember 1975 sampai akhir 1979. Tidak diragukan lagi bahwa penguasa militer Indonesia di Timor-Leste sadar akan meningkatnya jumlah kematian akibat kelaparan di kamp-kamp di bawah pengawasannya.

Sejak paling tidak akhir 1976 Pemerintah Indonesia mengizinkan bantuan makanan kepada orang-orang dan kamp-kamp di bawah pengawasannya melalui Palang Merah Indonesia dan Gereja Katolik. Semua laporan kepada Komisi menunjukkan bahwa bantuan ini terlambat dan terlalu sedikit untuk mencegah kelaparan di kamp-kamp antara 1977 dan 1979. Upaya Gereja Katolik untuk memberikan bantuan lebih banyak dan menangani atau memonitor distribusi bantuan, dihambat secara sistematis.

Penolakan Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan program bantuan internasional, dan membatasi bantuan dalam jumlah yang tidak memadai yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia dan sedikit dari Gereja Katolik, jelas berkaitan dengan kebijakan yang sama yang mendorong pasukan keamanan Indonesia memindahkan penduduk, menghancurkan persediaan makanan mereka, menahan mereka di kamp-kamp, dan tidak mengizinkan mereka bergerak untuk menanam atau mencari makanan. Semua tindakan ini dilakukan dengan tujuan menghancurkan resistansi terhadap pendudukan Indonesia, dengan memakai cara apa saja tanpa pandang bulu apakah cara-cara ini tidak manusiawi atau melanggar hukum internasional atau hukum Indonesia.

Apabila lembaga bantuan internasional diberi akses kepada orang-orang yang kelaparan waktu itu, mereka bisa dengan cepat mencegah kematian ribuan orang. Komisi berkesimpulan bahwa penolakan kepada lembaga bantuan internasional

untuk memberikan makanan kepada mereka yang terancam kelaparan adalah karena militer Indonesia tidak menginginkan adanya saksimata atau halangan terhadap kampanye militernya untuk menundukkan penduduk di bawah kekuasaannya dan memperlemah Resistansi.

Keputusan mengizinkan Catholic Relief Services dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) untuk melakukan survei di Timor-Leste, pada April dan Juli 1979, dan kemudian mengizinkan lembaga-lembaga ini mulai beroperasi pada September 1979, bukan karena saat itu skala kelaparan sudah mencapai tingkat yang gawat—karena ini sudah diketahui berbulan-bulan sebelumnya. Yang berubah pada September 1979 ialah bahwa militer Indonesia percaya bahwa kampanye untuk menghancurkan Resistansi pada dasarnya sudah berakhir. Pada periode antara permintaan awal dan pemberian izin, puluhan ribu penduduk sipil Timor mati kelaparan, baik di dalam maupun di luar kamp-kamp.

Operasi bantuan internasional yang mulai pada akhir 1979 mencapai kebanyakan penduduk di kamp-kamp dan penduduk lain yang membutuhkan. Hal ini pada dasarnya mengakhiri kondisi kelaparan yang terjadi di seluruh Timor-Leste.

Komisi menerima bukti dari penduduk Timor yang bekerja dengan lembaga internasional waktu itu, dari wakil Gereja dan dari penerima bantuan, bahwa bantuan darurat secara rutin dialihkan dari sasaran yang direncanakan, untuk dijual untuk keuntungan pribadi atau digunakan sendiri.

Kesimpulan

Dalam mempertimbangkan tanggung jawab penguasa sipil dan militer Indonesia atas kematian paling tidak 100.000 penduduk Timor akibat kelaparan dan penyakit yang berhubungan dengan kelaparan selama periode konflik tetapi secara khusus pada akhir dekade 1970-an, Komisi mempertimbangkan fakta-fakta berikut, yang semuanya diperkuat oleh ratusan pernyataan saksi, wawancara, dan dokumen sekunder:

1. Antara 1976 dan 1979 anggota pasukan militer Indonesia secara sengaja menghancurkan banyak tanaman pangan, membantai ternak, menghancurkan sumber makanan di hutan, dan memindahkan sebagian besar penduduk Timor yang bergantung pada sumber makanan tersebut ke dalam situasi di mana hidup mereka berada di bawah pengawasan pasukan militer Indonesia.
2. Mereka yang ditahan tidak diberi makanan yang memadai untuk bertahan hidup dan mereka secara paksa dilarang bergerak untuk menanam atau mencari makanan tambahan.
3. Militer Indonesia pasti mempunyai persediaan makanan dalam jumlah besar dari persediaan makanan pemerintah. Mereka tidak membagikan makanan ini kepada orang-orang yang berada di bawah pengawasan mereka.
4. Ketika menjadi jelas bahwa banyak penduduk sipil mati kelaparan, tidak ada perubahan kebijakan—militer masih tidak memberikan makanan dalam jumlah memadai kepada orang-orang yang kelaparan.

5. Ketika lembaga internasional meminta izin membagikan makanan dalam jumlah besar, yang bisa mencegah kematian lebih lanjut, permintaan mereka ditolak.

Komisi percaya bahwa mereka yang di lapangan, yang memimpin dan melaksanakan operasi militer yang secara langsung mengakibatkan kekurangan makanan, pasti tahu bahwa kelaparan massal akan terjadi dan sebenarnya mereka menginginkan hal ini terjadi. Orang-orang seperti ini menggunakan kelaparan sebagai taktik militer untuk menetralkan dukungan aktif penduduk sipil terhadap Fretilin. Komisi menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab langsung atas terciptanya kondisi kelaparan untuk mencapai tujuan militer.

Komisi percaya bahwa gaung operasi militer Indonesia jelas bisa diperkirakan oleh para pemimpin militer dan politik di tingkat nasional. Para pemimpin ini karena itu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan konsekuensinya.

Komisi bagaimanapun tidak perlu hanya mengandalkan pada kemungkinan yang bisa diperkirakan untuk menyatakan bahwa para pemimpin Indonesia bertanggung jawab karena pada satu titik tertentu para pemimpin Indonesia benar-benar mendapatkan pemahaman mengenai bencana yang muncul di Timor-Leste. Setelah operasi militer berjalan, markas besar militer Indonesia dan para pemimpin politik pasti menerima laporan dan informasi terbaru secara teratur dari komandan di lapangan. Namun demikian, bagaimanapun penyebab kelaparan tersebut disajikan dalam laporan, apakah sebagai akibat dari kekeringan, kondisi penduduk yang sudah parah saat turun dari gunung, atau tidak cukupnya persediaan makanan, Komisi percaya bahwa laporan-laporan tersebut pasti memberikan informasi bahwa ribuan penduduk kelaparan, terutama dengan meningkatnya perhatian dunia internasional.

Paling tidak sejak 1977 lembaga bantuan internasional mulai meminta izin masuk ke Timor-Leste untuk memberikan bantuan. Diones Dili mengajukan permintaan resmi bantuan makanan kepada dutabesar asing di Jakarta pada Juli 1977. Lembaga Catholic Relief Services dari Amerika Serikat mengatakan bahwa permintaannya untuk masuk ke Timor-Leste selalu diajukan “secara teratur” sepanjang 1977 dan 1978. Komisi dengan demikian bisa menyimpulkan dengan pasti bahwa paling tidak pada 1977 para pemimpin Indonesia mempunyai pengetahuan langsung dan penuh mengenai situasi yang kritis dan, lebih jauh, mereka sadar bahwa operasi militer telah menciptakan kondisi kelaparan. Dengan pemahaman ini mereka tidak mengambil langkah untuk mencegah kelaparan massal yang terjadi.

Atas dasar keseluruhan bukti ini Komisi berkesimpulan bahwa tindakan pejabat pemerintah Indonesia dan personel militer yang terlibat dalam program penghancuran sumber makanan, menahan banyak penduduk sipil Timor di kamp-kamp, serta menghambat penduduk untuk mendapatkan makanan yang memadai untuk bertahan hidup, merupakan pembinasaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan yang tidak adil

Pada akhir 1983, sebagai salah satu aspek dari kebijakan untuk “menormalisasi” Timor-Leste, Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa beberapa orang yang dicurigai bekerja untuk kemerdekaan harus diajukan ke pengadilan atas tuduhan subversi dan pengkhianatan. Ratusan orang Timor diadili dan dihukum atas pelanggaran tersebut selama 16 tahun berikutnya.

Komisi mencermati dokumen-dokumen pengadilan dari lebih daripada 200 kasus yang diajukan ke pengadilan Distrik Dili. Selain itu Komisi mewawancarai dan menerima pernyataan dari puluhan orang yang langsung terlibat dalam kasus-kasus tersebut maupun kasus-kasus lainnya (termasuk pengadilan orang-orang Timor yang ditangkap di Jakarta selama awal dekade 1990-an) sebagai tertuduh, saksi, dan pengacara, baik orang Timor maupun orang Indonesia. Berdasar bukti ini Komisi berkesimpulan bahwa terdapat sedikit keterkaitan antara keadilan dan proses pengadilan, yang pada dasarnya merupakan sebuah sandiwara. Pengadilan-pengadilan ini pada dasarnya sandiwara yang canggih, yang dirancang untuk menciptakan ilusi tentang keadilan dan proses pengadilan. Proses pengadilan menyembunyikan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut merupakan alat untuk menjamin adanya keputusan hukum terhadap musuh-musuh politik dengan hukuman penjara yang bisa berarti penjara seumur hidup bagi beberapa tahanan tersebut, sekaligus memberikan tanggapan bagi kritik dari luar negeri mengenai militer yang terlalu mengandalkan cara-cara di luar hukum.

Pengadilan menangani berbagai pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun hukum internasional. Tertuduh secara rutin disiksa dan diintimidasi agar menandatangani berita acara penyidikan yang berisi pengakuan dan bukti yang memberatkan tertuduh. Berita acara ini menjadi dasar dari banyak dakwaan. Petugas militer dan polisi Indonesia secara konsisten memberikan bukti palsu di bawah sumpah kepada pengadilan, dan mengintimidasi saksi-saksi lain agar melakukan hal yang sama, atau agar tidak memberi kesaksian samasekali. Tertuduh tidak diberikan haknya untuk memilih pengacara sendiri untuk membela mereka, dan dalam kebanyakan kasus pembela ditunjuk yang kerjanya tidak lebih daripada mendukung tuntutan jaksa. Para hakim mengabaikan indikasi adanya perilaku tidak etis dan pemalsuan bukti-bukti, dan memberikan keputusan bersalah dalam setiap kasus. Hukuman berat secara tidak seimbang dan tidak mempertimbangkan jangka waktu penahanan di tempat tahanan militer. Dalam ratusan kasus yang dicermatinya, Komisi tidak menemukan satu kasus pun di mana tertuduh dibebaskan sepenuhnya. Proses banding tidak lebih hanya mendukung keputusan hakim pengadilan yang tidak adil.

Tingkat rekayasa proses pengadilan untuk mendapatkan vonis bersalah yang sudah ditentukan sebelumnya yang didasarkan pada tujuan politik tecermin dalam keputusan-keputusan pengadilan pada gelombang pertama pengadilan politik, yang terjadi antara 1983 dan 1985.

Komisi mencermati 232 kasus yang berkaitan dengan pengadilan-pengadilan ini. Kasus-kasus ini berakhir pada:

- 232 vonis atas dasar tuduhan subversi dan pengkhianatan
- 232 tertuduh dibela oleh pengacara yang ditunjuk pemerintah
- 0 saksi yang meringankan dipanggil
- 0 kasus pembebasan dari semua tuduhan
- 0 banding terhadap keputusan pengadilan diajukan

Komisi berkesimpulan bahwa manipulasi secara sistematis proses hukum untuk menghukum musuh politik dalam ratusan penyidikan dan pengadilan bisa terjadi karena adanya upaya kolusi dan kerjasama antara intel militer yang menahan dan menginterogasi tertuduh, polisi yang menyiapkan dakwaan, jaksa yang mengajukan dakwaan di pengadilan, tim pembela yang tidak bisa memberikan pembelaan yang sungguh-sungguh kepada tertuduh, dan para hakim yang menangani proses hukum—dan membuat vonis hukum dalam semua kasus.

Komisi berkesimpulan bahwa pelanggaran yang terjadi dalam pengadilan politik merupakan bagian dari program terencana dan sistematis yang pasti melibatkan pejabat senior departemen pengadilan Indonesia, komandan militer senior, dan petugas militer berpangkat lebih rendah, polisi, hakim, jaksa, dan tim pembela.

Anggota angkatan bersenjata Indonesia

Personel militer Indonesia secara sewenang-wenang menahan orang-orang yang terlibat kegiatan prokemerdekaan dan menahan mereka dalam jangka waktu yang lama, kadang sampai beberapa tahun, sebelum diajukan ke pengadilan, meskipun dalam banyak kasus tidak ada atau hanya ada sedikit bukti yang memberatkan mereka. Mereka secara rutin menggunakan ancaman, penyiksaan, dan intimidasi selama interogasi untuk mendapatkan pengakuan untuk dipakai sebagai bukti di pengadilan. Mereka juga secara rutin memalsukan bukti material, memberikan pernyataan palsu, tidak memberi tahu tertuduh tentang hak-hak mereka, dan tidak mengizinkan orang yang diinterogasi untuk mendapatkan penerjemah atau pengacara.

Komisi berkesimpulan bahwa bagian intel dari pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam mengarahkan keputusan pengadilan politik pada setiap tahapan dari interogasi sampai proses pengadilan. Mereka memastikan agar proses pengadilan bisa mencapai tujuannya, yaitu menghukum musuh politik pendudukan.

Komisi berkesimpulan bahwa komandan dari para pelaku langsung pelanggaran ini juga bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pemalsuan bukti yang digunakan di pengadilan, dan memengaruhi proses pengadilan dalam ratusan pengadilan politik.

Anggota polisi Indonesia

Komisi berkesimpulan bahwa anggota polisi Indonesia yang terlibat dalam persiapan pengadilan politik yang diteliti Komisi bertanggung jawab dan harus

mempertanggungjawabkan kolusi dengan bagian intel dan anggota angkatan bersenjata lainnya dalam penggunaan penyiksaan dan intimidasi untuk memastikan bahwa pengakuan ditandatangani, untuk mempersiapkan bukti material palsu yang digunakan di pengadilan, dan karena bekerjasama dengan jaksa penuntut untuk memastikan bahwa bukti yang meringankan kasus tertuduh tidak diajukan ke pengadilan. Mereka bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami korban pengadilan yang tidak adil selama bertahun-tahun dalam penjara, penganiayaan, dan penelantaran yang terjadi akibat tindakan mereka.

Jaksa penuntut

Komisi berkesimpulan bahwa jaksa penuntut yang mengajukan dakwaan di pengadilan bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan kolusi dan kerjasama dengan intel militer dan polisi, yang melibatkan pelanggaran berat. Cara yang digunakan ialah penyiksaan, intimidasi, dan pemalsuan bukti untuk memastikan keputusan vonis bersalah terhadap mereka yang diajukan ke pengadilan. Mereka karena itu tidak bisa menjalankan sumpah tugas mereka untuk bertindak secara mandiri demi kepentingan keadilan.

Perilaku jaksa penuntut tidak bisa secara memuaskan dijelaskan dengan cara apapun yang tidak menghapus keterlibatan mereka dalam tindakan pelanggaran. Mereka secara rutin mengajukan bukti yang tidak benar ke pengadilan, terutama pengakuan yang jelas merupakan akibat penyiksaan dan tidak diterapkannya proses yang layak, tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi pemberat dengan sungguh-sungguh atau mempertanyakan bukti yang dipalsukan, dan tidak mengajukan materi yang membebaskan terdakwa, yang merupakan kewajiban mereka sesuai aturan dalam sistem peradilan sipil. Mereka juga bertanggung jawab atas penderitaan korban pengadilan yang tidak adil selama bertahun-tahun dipenjara, penganiayaan, dan penelantaran yang merupakan akibat langsung dari tindakan mereka.

Tim pembela yang ditunjuk pengadilan

Kebanyakan tim pembela yang ditunjuk pengadilan dalam ratusan kasus pengadilan politik yang dicermati Komisi bertindak bukan dalam kerangka memberikan yang terbaik kepada klien mereka, tetapi sebagai bagian dari upaya kolusif untuk memastikan keputusan vonis bersalah terhadap musuh politik yang menentang pendudukan. Komisi berkesimpulan bahwa tidak ada kesimpulan lain yang bisa menjelaskan fakta bahwa para pengacara ini tidak bisa memanggil satu orang saksi yang meringankan dari 232 kasus pengadilan politik yang diselenggarakan di Dili antara 1983 dan 1985.

Peran tim pembela dalam sistem hukum yang berjalan sesuai dengan supremasi hukum sangat penting, karena mereka berada dalam posisi untuk mencecar petugas negara yang telah melanggar hak orang yang didakwa melakukan tindakan kriminal. Tim pembela wajib bertindak sesuai dengan permintaan klien mereka. Tim pembela tidak bisa mengabaikan fakta bahwa klien mereka telah ditahan tanpa proses yang layak, telah disiksa, dan dipaksa menandatangani pengakuan di

bawah ancaman, dan bahwa bukti yang diajukan yang memberatkan terdakwa telah dipalsukan. Karena tidak menjalankan kewajibannya untuk mempertanyakan hal-hal tersebut di pengadilan dan membela klien mereka dengan sungguh-sungguh terhadap dakwaan berat yang mereka hadapi, dengan beberapa perkecualian, tim pembela ikut bertanggung jawab atas dimasukkannya klien mereka ke penjara secara tidak adil dan atas penderitaan para klien karena mengalami perlakuan buruk dan penelantaran akibat dari proses pengadilan.

Hakim yang menangani kasus di pengadilan.

Panel hakim memegang tanggung jawab akhir atas berlangsungnya pengadilan. Dalam sistem hukum sipil Indonesia panel hakim punya wewenang mengajukan pertanyaan kepada semua saksi, memeriksa semua bukti, dan mempertimbangkan bagaimana bukti yang diajukan ke pengadilan dibuat.

Hanya ada satu penjelasan logis mengenai kinerja para hakim dalam pengadilan politik yang konsisten dengan fakta-fakta berikut:

- Dalam ratusan pengadilan yang ditangani, tidak satu saksi pun yang meringankan korban ditampilkan
- Tidak satu hakim pun yang mempertanyakan apakah terdakwa mengalami paksaan dan siksaan saat menandatangani pengakuan
- Tidak satu hakim pun menanyakan keabsahan bukti yang diajukan jaksa penuntut
- Para hakim sendiri melakukan sejumlah kesalahan prosedural

Penjelasannya ialah bahwa para hakim yang menangani kasus pengadilan juga terlibat dalam upaya kolusi untuk memastikan agar aktivis prokemerdekaan dihukum. Komisi karena itu menyimpulkan bahwa para hakim yang terlibat dalam pengadilan bertanggung jawab atas pelanggaran sumpah jabatan mereka yang sakral, dan karena membiarkan pengadilan dipakai sebagai alat untuk menghakimi musuh politik pendudukan. Karena tindakan mereka para hakim juga berperan dalam melembagakan praktik-praktik yang memungkinkan hukum dimanipulasi untuk kepentingan politik.

Setiap hakim yang menangani sandiwara pengadilan politik juga secara pribadi harus mempertanggungjawabkan penderitaan yang dialami korban pengadilan yang tidak adil selama bertahun-tahun dalam penjara, perlakuan buruk, dan penelantaran sebagai akibat langsung tindakan para hakim ini.

Pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak

Indonesia, sebagai negara penguasa di Timor-Leste, mempunyai kewajiban hukum yang jelas untuk menghormati hak anak. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan hukum kebiasaan dalam hukum humaniter internasional yang tertuang dalam Konvensi Jenewa IV. Selain kewajiban khusus, Indonesia mempunyai kewajiban umum untuk melindungi anak-anak dan tidak membahayakan mereka dengan

menempatkan mereka dalam situasi yang berbahaya. Menurut hukum internasional seorang anak adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Bahkan setelah menandatangani Konvensi Hak Anak pada September 1990, Indonesia tidak bisa memenuhi kewajiban hukumnya yang mengikat.

Selama masa pendudukan Indonesia juga terikat oleh standar hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia. Hal ini secara konsisten dilanggar dengan berbagai cara, termasuk dengan secara paksa merekrut anak-anak untuk membantu angkatan bersenjata, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penganiayaan terhadap anak-anak, pembunuhan anak-anak dalam berbagai kesempatan, termasuk di mana mereka atau keluarga mereka dicurigai sebagai musuh politik, dan perkosaan serta perbudakan seksual anak-anak oleh personel militer di dalam dan di luar instalasi militer.

Penahanan anak-anak secara sewenang-wenang

Selama pendudukan, petugas pemerintah Indonesia secara sewenang-wenang menahan anak-anak dan bertanggung jawab atas pelanggaran dalam skala luas dan sistematis saat anak-anak ini berada di tahanan mereka. Perlakuan terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata yang dicurigai menentang secara politik terhadap pendudukan tidak sah Timor-Leste tidak membedakan antara korban orang dewasa dan anak-anak. Dari 1975 sampai 1999 anak-anak biasa diikat, dipukuli, ditendang, diperkosa, disetrum, disundut dengan rokok, direndam di air, disekap sendirian di sel gelap, diancam dibunuh, atau diteror oleh petugas pasukan keamanan Indonesia. Beberapa anak meninggal akibat dari perlakuan ini. Pelaku pelanggaran tidak, dengan sangat sedikit pengecualian, diberi hukuman atau tindakan disiplin apapun.

Pada tahun-tahun setelah invasi, anak-anak ditahan dalam skala besar setelah ditangkap atau menyerah dan kemudian ditempatkan di kamp-kamp permukiman. Makanan, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan sangat tidak memadai, dan pembatasan pergerakan membatasi kemampuan mereka dan keluarga mereka untuk mencari makanan tambahan selain yang mereka terima. Anak-anak juga sering ditahan di pusat-pusat penahanan resmi dan fasilitas militer setelah menyerah atau ditangkap. Anak-anak juga menjadi bagian yang cukup besar dari tahanan yang ditempatkan di Ataúro antara 1980 dan 1986, baik dengan keluarga mereka atau terpisah dari keluarga mereka. Diperkirakan ribuan anak meninggal akibat kondisi yang berat dan kekurangan makanan di kamp-kamp permukiman dan di Ataúro.

Anak-anak juga ditahan karena tindakan orangtua mereka atau anggota keluarga lainnya, yang merupakan bentuk hukuman proksi/hukuman perwakilan (*proxy*) yang keji.

Pelajar dan anak-anak sekolah dijadikan sasaran penangkapan dan penahanan ketika demonstrasi terbuka mulai dilakukan pada dekade 1990-an. Penguasa Indonesia menahan anak-anak selama dan setelah demonstrasi, dan kadang untuk mencegah terjadinya demonstrasi. Banyak anak yang ditahan mengalami pelanggaran berat,

termasuk penyiksaan. Anak-anak juga ditangkap dan ditahan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia dan anggota milisi selama kekerasan seputar Jajak Pendapat pada 1999. Ancaman kekerasan juga dipakai untuk memaksa anak-anak bergabung dengan kelompok milisi.

Pembunuhan anak-anak

Anak-anak dibunuh dalam berbagai konteks, termasuk selama konflik bersenjata terbuka, dalam pembunuhan massal, dalam tahanan dan dieksekusi. Pada tahun-tahun awal konflik banyak anak dibunuh bersama keluarga mereka selama operasi militer, atau saat tertangkap oleh salah satu pihak di wilayah yang diperebutkan. Pada tahun-tahun setelahnya, korban anak-anak biasanya anak remaja yang menjadi sasaran karena dicurigai melakukan kegiatan prokemerdekaan.

Pasukan dan tentara Indonesia membunuh anak-anak pada periode 1975-79 dalam konteks lebih luas kampanye Indonesia untuk menaklukkan Timor-Leste. Mereka tidak membedakan anak-anak dari orang dewasa dalam hal ini. Anak-anak yang keluar mencari makan, baik sendirian maupun bersama orang dewasa, berisiko ditembak oleh ABRI atau anggota Hansip. Kelompok-kelompok penduduk sipil tidak bersenjata, termasuk anak-anak, yang tinggal di luar kamp-kamp permukiman yang dikuasai Indonesia dalam beberapa kasus dieksekusi secara acak.

Dari 1980, anak-anak dibunuh ketika ABRI melakukan pembalasan dalam skala luas dan sering membabitnya sebagai tanggapan atas serangan Resistansi. Anak-anak merupakan bagian dari korban yang terbunuh dalam operasi pembersihan skala besar setelah serangan Falintil di Dili pada Juni 1980, di Koramil Mau Chiga (Hato Builico, Ainaro) pada Agustus 1982 dan terhadap unit Zipur ABRI di Kraras (Viqueque, Viqueque) pada Agustus 1983. Dalam kasus-kasus tersebut, anak-anak dibunuh dalam serangan-serangan membabitnya terhadap kelompok-kelompok penduduk sipil dan karena mereka sendiri dicurigai memberi dukungan kepada Falintil.

Pada 1999 anak-anak dibunuh dalam operasi-operasi untuk mencari anggota jaringan klandestin atau Falintil, dalam serangan-serangan militer untuk menghukum masyarakat karena mendukung atau membantu perjuangan prokemerdekaan, atau dalam pembunuhan yang terjadi setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat. Baik sebelum maupun setelah Jajak Pendapat, anak-anak menjadi sasaran empuk ketika gereja dan tempat-tempat lain, di mana orang-orang mencari perlindungan, diserang. Pelaku yang dilaporkan adalah milisi bersekutu dengan militer Indonesia atau TNI yang bertindak sendirian.

Pelanggaran seksual terhadap korban anak

Pasukan keamanan Indonesia, kelompok binaan Timor, dan pihak-pihak berwenang lainnya menggunakan kekerasan seksual terhadap anak, baik untuk tujuan strategis maupun sekadar oportunistis, selama pendudukan. Anak-anak diperkosa dan dijadikan sasaran pelanggaran dalam skala luas oleh anggota pasukan keamanan Indonesia di dalam lembaga-lembaga militer, di lokasi-lokasi resmi lainnya, dan bahkan di rumah mereka di hadapan keluarga mereka. Bagi anak-anak, seperti juga

orang dewasa, kekerasan seksual dilakukan secara terbuka tanpa takut sanksi oleh semua tingkatan militer dan oleh kelompok binaan Timor, serta pihak-pihak sipil berwenang seperti kepala desa.

Skala kekerasan seksual yang bersifat oportunistis terhadap anak-anak mencerminkan suatu iklim impunitas yang dilakukan oleh anggota militer pada tingkatan paling tinggi sampai kelompok binaan Timor sampai penguasa sipil yang memegang kekuasaan.

Banyak korban kekerasan seksual adalah anak perempuan yang keluarganya dicurigai mendukung Fretilin/Falintil. Setelah mengalami pelanggaran, anak-anak perempuan ini menjadi rentan terhadap eksploitasi jangka panjang, sampai pada perbudakan seksual dalam jangka waktu yang lama atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual yang dilakukan berulang-ulang oleh anggota pasukan keamanan Indonesia.

Meskipun pejabat senior militer dan sipil pasti mengetahui bahwa tindakan tersebut salah, Komisi hanya menemukan satu kasus di mana petugas pemerintah diadili. Perlu dicatat bahwa kasus ini melibatkan Hansip Timor berpangkat rendah.

Perekrutan paksa anak-anak untuk bertugas di militer

Militer Indonesia merekrut ribuan anak-anak untuk dijadikan Tenaga Bantuan Operasi (TBO), sebagai pembantu personel militer dan unit saat melakukan operasi dan di basis-basis militer. Meskipun sebagai TBO anak-anak ini bekerja purnawaktu untuk pasukan keamanan Indonesia, mereka bukan anggota angkatan bersenjata dan tidak mendapatkan insentif seperti tentara reguler, seperti gaji, pangkat, atau seragam.

TBO direkrut sepanjang periode pendudukan tetapi jumlahnya mencapai angka tertinggi selama periode 1976-81 saat operasi militer berada pada puncaknya. ABRI menggunakan berbagai cara untuk merekrut anak-anak sebagai TBO, dari melalui paksaan sampai pemberian imbalan. Beberapa anak bekerja sebagai TBO secara sukarela. Namun demikian, dalam situasi keputusan pada waktu itu, batas antara perekrutan secara sukarela dan paksa tidak pernah jelas. Militer Indonesia lebih suka menggunakan anak-anak sebagai TBO dan berusaha merekrut anak-anak ketimbang orang dewasa.

Perekrutan anak-anak oleh tentara secara pribadi diketahui oleh struktur militer paling atas. Tidak ada upaya untuk mencegah terjadinya hal ini. Adanya upaya untuk mengatur praktik semacam ini menunjukkan bahwa hal tersebut disetujui. Pada dasarnya, tidak ada peraturan mengenai perlakuan TBO anak oleh tentara secara pribadi.

Hubungan antara TBO anak dan tentara yang mereka layani samasekali tidak seimbang. Tentara memperlakukan TBO anak seolah-olah mereka mempunyai hak milik atas anak-anak ini. Mereka mengawasi gerak-gerik, tugas, dan kondisi hidup anak-anak ini, serta terutama hidup mati mereka. Kadang para tentara ini masih punya kontrol atas TBO setelah tugas mereka berakhir; kadang mereka menyerahkan TBO anak kepada tentara lain; kadang mereka ditinggalkan bertahan hidup sendiri.

TBO anak melakukan tugas yang, meskipun biasanya tidak melibatkan mereka secara langsung dalam pertempuran, menempatkan mereka dalam bahaya. Paling tidak kondisi kerja mereka berisiko bagi kesehatan mereka dan menutup kesempatan sekolah mereka.

Selain menjadi TBO, anak-anak juga direkrut bersama orang dewasa untuk operasi militer. Dalam hal Operasi Kikis yang berlangsung pada Juli-September 1981, di beberapa daerah, anak-anak berusia 10 tahun menjadi bagian dari puluhan ribu orang Timor yang secara paksa direkrut untuk melakukan tugas menemani personel militer Indonesia.

Dari akhir 1998 anak-anak direkrut menjadi milisi yang diorganisasi, dipersenjatai, dilatih, dan didanai oleh ABRI/TNI. Beberapa anak bergabung dengan sukarela, biasanya karena mereka atau keluarga mereka prointegrasi dan setuju dengan tujuan milisi. Anggota milisi yang masih anak-anak terlibat dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat termasuk pembunuhan, serangan fisik, dan perkosaan serta penghancuran harta benda dalam skala luas. Dalam beberapa kasus, mereka yang direkrut dibayar, dengan sedikit uang atau makanan. Kebanyakan anak-anak ini tidak dibayar.

Pemindahan anak-anak Timor secara paksa ke Indonesia

Sering anak-anak Timor diambil dari keluarga dan negeri mereka untuk dibawa ke Indonesia sepanjang periode pendudukan. Pemindahan anak-anak ke Indonesia berlangsung dalam berbagai bentuk, dari penculikan oleh tentara secara pribadi sampai program pendidikan yang didukung pemerintah. Meskipun tingkat paksaan yang dilakukan oleh pribadi maupun lembaga berbeda dalam pemindahan anak, sering ada unsur ancaman dan, kadang, penggunaan kekerasan.

Dalam tahun-tahun pertama invasi, tentara reguler merupakan pelaku utama pemindahan anak-anak Timor. Seperti dalam kasus TBO anak (yang sebagian juga dibawa ke Indonesia oleh tentara setelah tugas mereka berakhir), anak-anak yang dibawa ke Indonesia sering diperlakukan sebagai budak dan dibawa secara paksa, dimasukkan ke dalam kotak, dan disuruh melakukan pekerjaan rumah tangga untuk keluarga di mana mereka tinggal.

Lembaga, seperti rumah sakit dan panti asuhan Seroja, memudahkan pemindahan anak oleh tentara Indonesia. Meskipun staf secara pribadi mengatakan kepada Komisi bahwa mereka merasa khawatir dengan praktik semacam ini, tidak ada bukti bahwa lembaga menolak terlibat.

Upaya untuk mengatur praktik ini ditetapkan pada awal dekade 1980-an, tetapi Komisi melihat sedikit bukti bahwa peraturan ini diterapkan atau ada pengawasan mengenai bagaimana peraturan tersebut diterapkan. Apabila persetujuan dimintakan dari orangtua, orangtua sering tidak diberi cukup informasi atau secara terang-terangan ditipu. Lebih jauh, Komisi diberitahu mengenai kasus-kasus di mana persetujuan dimintakan dengan ancaman kekerasan.

Komisi tidak melihat satu kasus pun di mana ada upaya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Timor oleh orang-orang yang berkebangsaan, berbahasa, atau beragama sama. Sebaliknya, Komisi melihat banyak kasus adanya upaya terang-terangan untuk mengganti agama anak dan mengubah anak tersebut menjadi anak Indonesia.

Tidak ada cukup bukti untuk menentukan apakah pemindahan dalam skala besar anak Timor merupakan kebijakan resmi pemerintah atau militer Indonesia. Namun demikian, ada bukti jelas tentang keterlibatan pejabat-pejabat tinggi dalam beberapa kasus, sampai Presiden Soeharto dan anggota keluarganya.

Pemerintah Indonesia tidak berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengatur praktik pemindahan anak melalui penetapan suatu kebijakan adopsi yang dilakukan oleh pihak yang kompeten sesuai hukum yang berlaku.

Komisi berkesimpulan bahwa pasukan keamanan Indonesia tidak membedakan antara anak-anak dan orang lain dalam kampanye militernya di Timor-Leste. Selain itu, militer secara khusus mencari anak-anak yang keluarganya dicurigai mempunyai kaitan dengan perjuangan prokemerdekaan, yang berakibat pada penahanan, penyiksaan, pembunuhan, dan perkosaan. Jumlah kasus pelanggaran yang dilaporkan yang dilakukan terhadap anak-anak, fakta bahwa pejabat senior pemerintah maupun militer di Timor-Leste pasti mengetahui tentang pelanggaran tersebut, keterlibatan langsung pejabat senior militer dan pemerintah dalam tindak pelanggaran seksual terhadap anak-anak, dan pemanfaatan anak-anak dalam skala luas dan sistematis sebagai Tenaga Bantuan yang sebagian besar tidak dibayar, mendorong Komisi menyimpulkan bahwa hak anak-anak dilanggar dalam skala luas dan sistematis selama konflik. Komando tertinggi angkatan bersenjata Indonesia dan pejabat senior pemerintah di Timor-Leste bertanggung jawab atas keterlibatan mereka, tidak mengambil langkah yang memadai untuk mencegah, dan tidak menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran.

Tanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan selama konflik

Serangan terhadap penduduk sipil dan serangan membabituta

Selama konflik anggota pasukan militer Indonesia secara sistematis menyerang penduduk sipil, terutama mereka yang dicurigai menjadi pendukung gerakan kemerdekaan. Sering hukuman kolektif diberikan kepada keluarga dan masyarakat yang dicurigai mendukung Falintil. Serangan langsung dan sengaja terhadap penduduk sipil ini mengakibatkan hilangnya ribuan nyawa.

Selain itu, serangan sering dilakukan terhadap sasaran militer dengan cara membabituta dan berlebihan, sehingga terjadi kematian yang tak perlu di antara penduduk sipil. Ini khususnya terjadi dalam tahun-tahun awal pendudukan, saat banyak penduduk sipil masih tinggal di basis-basis Fretilin. Di mana serangan dilancarkan di daerah-daerah yang ada penduduknya, tidak ada peringatan dini yang diberikan kepada penduduk mengenai serangan tersebut.

Penghancuran harta-benda milik sipil

Komisi berkesimpulan bahwa anggota ABRI/TNI secara sistematis menghancurkan harta benda, termasuk bangunan dan barang-barang pribadi milik penduduk sipil, sebagai bagian rutin dari operasi militer. Tujuan penghancuran ini ialah untuk menghukum orang-orang Timor yang menentang pendudukan, untuk menciptakan iklim teror yang diharapkan memudahkan pengontrolan rakyat Timor, dan untuk melemahkan dukungan kepada gerakan prokemerdekaan.

Anggota ABRI secara sistematis menghancurkan sumber makanan selama dekade 1970-an dan awal dekade 1980-an. Mereka juga secara rutin mencuri dan merampas harta-benda orang-orang yang dicurigai mendukung Fretilin/Falintil.

Perlakuan buruk terhadap petempur musuh

Tawanan yang tertangkap oleh pasukan militer Indonesia sering dibunuh atau dihilangkan. Sejumlah besar anggota Fretilin dan Falintil menyerah karena ada tawaran amnesti yang dibuat Presiden Soeharto pada 1977 dan kemudian diperbarui, tetapi setelah menyerah mereka kemudian dieksekusi dan dilenyapkan.

Cara perang yang tidak sah

Komisi berkesimpulan bahwa kadang ABRI/TNI menggunakan senjata yang dilarang oleh hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata. Ini termasuk senjata kimia yang dipakai meracuni sumber air dan membunuh tanaman pangan dan tanaman hutan, dan mengakibatkan kematian ratusan korban sipil akibat keracunan.

Komisi juga berkesimpulan bahwa ABRI/TNI menggunakan napalm dan alat-alat pembakar lainnya, yang mengakibatkan penderitaan yang hebat di antara penduduk sipil termasuk kematian penduduk laki-laki, perempuan, dan anak-anak akibat terbakar.

Perekrutan paksa

Komisi menyatakan bahwa ABRI/TNI secara paksa merekrut ribuan penduduk laki-laki, perempuan, dan anak-anak Timor, untuk membantu operasi militer mereka, terutama selama 1975-81 dan periode kegiatan militer yang tinggi di seluruh wilayah Timor-Leste. Mereka yang menolak berpartisipasi dipukuli dan disiksa. Perekrutan paksa penduduk sipil yang tidak sah untuk operasi militer dilakukan untuk mendapatkan bantuan yang praktis dan murah dan melemahkan semangat menentang pendudukan.

Penduduk sipil lainnya dipaksa melakukan tugas jaga malam di desa mereka atau mencari keluarga mereka yang masih di gunung. Beberapa pejuang Falintil yang tertangkap dipaksa ikut operasi melawan Falintil, baik tanpa senjata atau dipersenjatai hanya dengan tombak untuk memastikan agar mereka tidak memberontak melawan komandan ABRI mereka.

Tanggung jawab atas pelanggaran hak ekonomi dan sosial rakyat Timor

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melakukan investasi ekonomi yang cukup banyak di wilayah Timor-Leste selama pendudukan. Secara khusus, pemerintah membangun jalan-jalan baru, jembatan, bangunan, rumah sakit, dan sekolah, yang sangat diabaikan pada masa penjajahan Portugis.

Namun demikian, di samping kemajuan-kemajuan infrastruktur yang tidak disangkal ini, hak ekonomi dan sosial rakyat Timor selalu dilanggar selama pendudukan. Lebih jauh, apabila investasi dalam bidang infrastruktur ditujukan untuk memikat “hati” rakyat Timor maka hal ini tidak berhasil karena tidak bisa menghapuskan pelanggaran hak sipil dan politik dalam skala besar yang dialami oleh rakyat yang sama.

Pelanggaran berat hak sipil dan politik penduduk juga secara langsung memengaruhi hak dasar sosial dan ekonomi. Secara terus-menerus petani miskin Timor, yang menjadi bagian terbesar penduduk Timor, kehilangan semua harta benda akibat operasi militer. Perlu waktu bertahun-tahun untuk pulih dari kondisi ini. Dampak dari pemindahan massal penduduk sipil karena alasan militer, terutama yang berakibat kelaparan dan kematian, terus terasa dalam jangka panjang. Keuntungan apapun yang dapat diambil oleh rakyat Timor-Leste dari investasi Indonesia di wilayah ini sebagian besar hilang akibat kekerasan dan penghancuran dalam skala besar dan sistematis yang dilakukan TNI dan milisi binaan setelah Jajak Pendapat 1999. Kekerasan ini menghancurkan rumah-rumah, dan segala harta benda yang ada di dalamnya, milik sekitar 60.000 keluarga.* Pasukan keamanan Indonesia dan milisi binaan mereka juga secara sistematis menghancurkan rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, dan sistem pengairan, dan membawa barang-barang yang bisa dibawa dan aset seperti kendaraan bermotor, komputer, dan mesin-mesin ke Timor Barat. Penghancuran rumah dan infrastruktur berskala luas selama penarikan pasukan Indonesia dari wilayah ini tidak punya tujuan militer. Hal ini hanya memastikan bahwa sekali lagi rakyat Timor-Leste tidak bisa makan atau tak lagi punya rumah, dan meningkatkan tantangan untuk membangun negara Timor-Leste baru yang merdeka.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) mengakui bahwa karena negara-negara berada dalam tahap perkembangan ekonomi yang berbeda, mereka tidak punya kemampuan yang sama untuk memenuhi semua hak yang tertuang di Kovenan. Kewajiban negara adalah untuk mengambil langkah guna memenuhi hak ekonomi dan sosial secara bertahap untuk mencapai hasil maksimal sesuai kemampuan negara. Namun demikian, pada saat yang sama, negara memiliki kewajiban utama yang harus dipenuhi. Ini termasuk tanggung jawab menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, papan, obat-obatan dasar,

* World Bank, Joint Assessment Mission, 1999, dan Survei Suco Timor-Leste.

dan pendidikan dasar. Negara juga diwajibkan tidak bertindak diskriminatif dalam memenuhi hak ekonomi dan sosial, serta tidak mengambil langkah mundur yang melemahkan kemampuan penduduk untuk menikmati hak-hak tersebut.

Komisi berkesimpulan bahwa Indonesia melanggar hak ekonomi dan sosial di semua tingkatan ini. Dalam banyak hal, negara Indonesia mengambil langkah keamanan ekstrem yang jelas bertentangan dengan pemenuhan kewajiban utamanya.

Karena prioritas yang berlebihan pada kebutuhan militer, Negara tidak memenuhi kebutuhan dasar penduduk, dan sering mengambil langkah yang bersifat retrogresif (memperburuk keadaan) dan diskriminatif.* Pada saat yang sama, Komisi berkesimpulan bahwa Negara Indonesia tidak memenuhi hak ekonomi dan sosial rakyat Timor semaksimal mungkin, dan pada akhir pendudukan, pembangunan Timor Timur masih tertinggal jauh dari provinsi yang paling miskin di Indonesia.

Hak atas sumberdaya alam

Komisi percaya bahwa perusahaan dagang yang memiliki hubungan langsung dengan militer dan Pemerintah Indonesia secara sengaja dan sistematis membayar petani kopi di bawah harga yang layak, sehingga melanggar hak petani atas kehidupan yang layak.

Aturan yang ditetapkan penguasa Indonesia dalam industri kopi adalah salah satu contoh di mana Indonesia mengabaikan unsur pokok hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri, yaitu hak untuk mengelola kekayaan dan sumberdaya alam secara bebas. Penguasa Indonesia melakukan pelanggaran yang sama dengan mengeksploitasi sumberdaya lain, termasuk kayu cendana dan jenis kayu lain, tanpa mempertimbangkan kelestariannya dan dengan tidak mengatur eksploitasi sumberdaya ini oleh orang lain. Bentuk eksploitasi sumberdaya alam ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan penduduk dan sering dipakai mendanai operasi militer, serta melanggar kewajiban penguasa pendudukan menurut hukum internasional.

Komisi berkesimpulan bahwa, selain melanggar hak rakyat Timor untuk mengelola sumberdaya alam mereka, Indonesia dan Australia membuat Perjanjian Kerjasama Celah Timor pada 1989 tanpa melibatkan rakyat Timor-Leste atau mempertimbangkan kepentingan mereka.

Hak atas makanan yang mencukupi

Iklm dan kualitas tanah Timor-Leste yang berbeda berarti bahwa kemampuan penduduk untuk bertahan hidup sangat lemah bahkan pada masa yang baik. Hidup bergantung pada kemampuan penduduk untuk bergerak bebas mencari makanan. Komisi berkesimpulan bahwa program investasi penguasa Indonesia mengabaikan pertanian. Tetapi di luar ini penguasa Indonesia juga mengambil langkah

* Banyak pelanggaran yang dibicarakan dalam Bagian ini adalah pelanggaran kewajiban utama ini, sering melibatkan berbagai pelanggaran yang sifatnya retrogresif.

pengamanan yang memperburuk kesempatan petani untuk hidup, terutama dengan memaksa mereka menempati daerah-daerah yang tidak subur di mana pergerakan mereka dibatasi. Motivasi utama kebijakan ini ialah untuk menjauhkan penduduk sipil dari Resistansi dan di daerah-daerah di mana mereka bisa diawasi secara mudah dan dikontrol oleh militer.

Perumahan dan tanah

Komisi berkesimpulan bahwa pemindahan yang berulang-ulang, perubahan batas administratif, dan tidak diakuinya hak kepemilikan dan praktik penggunaan tanah tradisional oleh Pemerintah Indonesia menciptakan orang-orang yang tidak memiliki tanah dan persengketaan tanah yang sangat kompleks. Meskipun pertimbangan keamanan memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi ini, pemenuhan kepentingan ekonomi pejabat militer dan sipil dan mitra usaha mereka yang tidak terkontrol juga memainkan peran yang besar dalam menciptakan kondisi ini. Terganggunya hak kepemilikan tanah dan pola penggunaan tanah telah menghasilkan dan akan terus mempunyai dampak yang merusak dasar ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Timor.

Kesehatan dan pendidikan

Meskipun investasi Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan cukup banyak dan mendorong berdirinya instalasi fisik sistem kesehatan dan pendidikan di seluruh wilayah ini, Komisi berkesimpulan bahwa investasi ini tidak efektif memecahkan persoalan kesehatan masyarakat yang kronis atau memenuhi kebutuhan dasar dalam belajar.

Banyak faktor berperan dalam menghasilkan kondisi ini. Salah satu efek samping dari pelanggaran yang sangat ekstrem, seperti penyiksaan dan perekrutan paksa, adalah kesehatan yang buruk dan terganggunya pendidikan. Pembangunan ekonomi yang berat-sebelah yang dicanangkan pemerintah Indonesia menciptakan siklus di mana kemiskinan pada satu sisi, dan kesehatan yang buruk dan prestasi pendidikan yang rendah di sisi lain, saling menguatkan. Konteks militerisasi yang tinggi dan faktor struktural lainnya, seperti kurangnya tenaga ahli dan komitmen banyak personel kesehatan dan guru Indonesia yang bertugas di Timor-Leste, menciptakan suatu pelayanan yang di bawah standar dan tidak dipercaya oleh penduduk setempat. Kebutuhan kesehatan dan pendidikan dasar sering dikalahkan oleh pertimbangan keamanan, seperti tecermin dalam pemukiman paksa banyak penduduk di daerah-daerah yang banyak penyakitnya yang sebelumnya tidak diminati, serta tecermin pula pada penekanan yang berlebihan pada propaganda di sekolah-sekolah.

Pemanfaatan sekolah untuk propaganda dan indoktrinasi sangat mengganggu pendidikan seluruh generasi pemuda Timor. Pendidikan dimanfaatkan secara demikian sebagai bagian dari pendekatan keamanan yang menyeluruh yang tujuan utamanya ialah agar semangat prokemerdekaan tidak muncul di antara generasi baru. Dalam konteks ini, mengajar anak-anak keterampilan yang akan meningkatkan prospek mereka dan memungkinkan mereka mencapai potensi mereka sebagai manusia, menjadi tujuan sampingan.

Tanggung jawab pribadi atas pelanggaran berskala luas dan sistematis

Berdasar keseluruhan bukti yang ada, Komisi berkesimpulan bahwa orang-orang berikut bertanggung jawab atas pola pelanggaran hak asasi manusia dalam skala luas dan sistematis yang dilakukan di Timor-Leste antara 1975 dan 1999. Orang-orang ini memegang posisi komando dalam pasukan keamanan Indonesia selama periode terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam skala luas dan sistematis. Mereka bertanggung jawab langsung atas pelanggaran tersebut atau mengetahui bahwa pelanggaran tersebut terjadi dan tidak mencegah atau menghukum pelaku.

Pertanggungjawaban tingkat tinggi

Seperti yang telah disebutkan, individu bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap umat manusia atau kejahatan perang dalam tiga keadaan. Pertama, di mana seorang individu secara sengaja melakukan, merencanakan, mengajak, memerintahkan, membantu, atau memperlancar perencanaan, persiapan, atau pelaksanaan suatu kejahatan. Kedua, seorang individu bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mengambil bagian dalam rencana bersama atau persekongkolan untuk memperlancar pelaksanaan suatu kejahatan. Tujuan atau rencana bersama bisa ditarik dari kenyataan bahwa dua atau lebih orang bertindak bersama untuk membuat terjadinya upaya kriminal bersama. Tidak harus ada perencanaan, rancangan, atau tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Pengetahuan tentang adanya satu rencana bersama untuk menganiaya orang-orang bisa ditarik dari kedudukan otoritas orang tersebut dalam kelompok.

Dalam sejumlah kasus, para perwira dan pejabat tinggi bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan tindakan ilegal. Ini paling jelas dalam kasus penyusupan-penyusupan yang mengarah pada invasi penuh 7 Desember dan invasi itu sendiri, yang melanggar asas-asas dasar hukum internasional yang melarang penggunaan tidak sah kekuatan oleh satu negara terhadap negara lain. Arsitek utama kebijakan ini—Mayor Jenderal Ali Moertopo, Kepala Operasi Khusus (Opsus); Mayor Jenderal Benny Murdani, Asisten Intelijen pada Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Wakil Kepala Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara); Letnan Jenderal Yoga Sugama, Kepala Bakin; dan Jenderal Maraden Panggabean, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia—bertanggung jawab atas perancangan dan pelaksanaannya. Presiden Soeharto bertanggung jawab atas pengesahannya.*

.....
* Komisi yakin bahwa bukti terhadap orang-orang ini sangat kuat karena dua alasan: pertama, karena masyarakat internasional dengan jelas menyatakan pandangannya bahwa invasi tersebut ilegal dengan banyak mengutuknya dalam pemungutan-pemungutan suara di Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa; kedua, karena pemahaman mengenai pemikiran resmi Indonesia dan prinsip-prinsip yang dipakai dalam pembentukannya, sebagaimana ditunjukkan oleh pembukaan catatan-catatan yang berhubungan dengan periode tersebut oleh Pemerintah Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Inggris.

Jarang tetapi bukan tidak ada perwira tinggi terlibat langsung dalam pelaksanaan pelanggaran hak asasi manusia.⁷ Tetapi sebagai masalah hukum dan masalah fakta, pertanggungjawaban atas kejahatan dari jenis yang telah dilakukan di Timor-Leste mengenai jauh melampaui orang-orang yang menjadi pelaku langsungnya.

Menurut hukum internasional, orang-orang bertanggung jawab tidak hanya untuk pelanggaran di mana mereka sendiri terlibat secara langsung sebagai pembunuh, penyiksa, atau pemeriksa. Seperti yang telah dicatat dalam bagian ini (dan lebih panjang dalam Bagian 2: Mandat Komisi), orang juga bertanggung jawab sebagai individu untuk kejahatan terhadap umat manusia jika mereka membantu atau menyuruh pelaksanaan kejahatan tersebut atau jika mereka berbuat untuk mencapai “tujuan kriminal bersama.” Mereka juga bisa memiliki pertanggungjawaban komando untuk, dan dengan demikian dimintai pertanggungjawaban mengenai, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Mereka memiliki tanggung jawab ini tidak hanya jika mereka memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan suatu kejahatan. Selain itu, seseorang yang berada dalam kedudukan atasan (baik menurut hukum atau dalam kenyataan) dan yang punya kontrol efektif atas bawahannya⁷ punya tanggung jawab komando jika suatu kejahatan dilakukan oleh bawahannya dan atasan mengetahui atau semestinya mengetahui kejahatan tersebut tetapi tidak melakukan apa-apa untuk mencegah atau menghukumnya.⁸ Hukum Timor-Leste dan Indonesia telah menyerap asas-asas ini pada hukum dalam negerinya.

Berdasarkan asas-asas tersebut Komisi berpandangan bahwa banyak orang pada tingkat tertinggi struktur militer dan sipil Indonesia mempunyai tanggung jawab individual dan komando atas pelanggaran hak asasi manusia menurut hukum internasional dan hukum dalam negeri.

Seperti yang ditegaskan beberapa kali, Komisi bukanlah pengadilan hukum. Komisi sering tidak berhasil menetapkan garis tanggung jawab yang jelas atau menentukan apakah seorang komandan bertanggung jawab sebagai individu, misalnya, untuk “membantu dan menyuruh” suatu kejahatan atau bertanggung jawab atas kegagalan dalam tugasnya sebagai seorang komandan. Salah satu sebab kesulitan ini ialah bahwa Komisi diberi tugas menyelidiki suatu konflik yang diakibatkan oleh suatu invasi dan yang oleh karena itu sifatnya unik bagi suatu komisi kebenaran. Para pelaku utama pelanggaran adalah warganegara dari negara lain, yang merupakan bagian dari satu rantai komando yang melampaui batas wilayah Timor-Leste dan tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang Indonesia.

Meskipun ada kesulitan seperti itu, Komisi yakin bahwa ada alasan yang kuat untuk menyimpulkan bahwa banyak anggota hierarki militer Indonesia—dan sebagian anggota hierarki sipil—seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dan hukum dalam negeri di Timor-Leste. Komisi mencapai kesimpulan ini berdasarkan sejumlah pertimbangan, yang semuanya

.....
* Komisi memperoleh sejumlah laporan yang menyebutkan keterlibatan komandan-komandan Korem secara langsung dalam pelanggaran. Selain itu, perwira-perwira rendah, orang-orang yang kemudian naik ke posisi tinggi dalam militer Indonesia, dilaporkan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

mengarah pada satu kesimpulan bahwa pelanggaran sistematis hak asasi manusia oleh anggota-anggota angkatan bersenjata secara kelembagaan dan individu didukung oleh komandan-komandan pada tingkat tertinggi struktur militer.*

Skala pelanggaran

Komisi memperoleh keterangan yang bersaksi mengenai skala besar-besaran pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota angkatan bersenjata Indonesia. Melalui proses pengambilan pernyataan saja Komisi memperoleh laporan mengenai lebih daripada 85.000 pelanggaran seperti itu, yang sebagian sangat besar (84%) melibatkan anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia, termasuk pasukan pendukungnya. Komisi yakin bahwa skala pelanggaran ini adalah bukti bahwa tindakan-tindakan itu didukung pada tingkat yang paling tinggi.

Pola pelanggaran

Pelanggaran hak asasi manusia yang paling intens terjadi selama dan segera sesudah operasi-operasi militer besar-besaran 1975-1984 dan 1999 pada waktu menjelang dan sesudah Jajak Pendapat. Semua jenis pelanggaran “integritas fisik,” termasuk penganiayaan dan penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan, serta pemindahan, termasuk pemindahan paksa, mencapai puncaknya pada periode-periode tersebut. Pada saat yang sama Komisi juga menemukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah ciri yang menetap selama pendudukan Indonesia. Komisi menerima laporan mengenai pelanggaran yang terjadi pada setiap tahun antara 1975 dan 1999. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi dalam cara yang sistematis. Dalam banyak tahun, represi banyak terjadi secara lokal, di Dili 1980, Ainaro 1982, dan Ermera pada awal dasawarsa 1990-an, tetapi tidak sistematis. Sepanjang masa pendudukan ada sistem tempat penahanan yang mencakup seluruh wilayah, di mana personel militer yang ditugaskan di sana melakukan penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan dengan menggunakan metode yang sama.

Strategi

Skala dan pola pelanggaran mengindikasikan kepada Komisi bahwa angkatan bersenjata Indonesia mengadopsi suatu strategi yang mengandalkan penggunaan pasukan dan teror yang besar untuk menundukkan warga. Unsur-unsur dari strategi ini meliputi: penggunaan semua cara yang ada pada angkatan bersenjata untuk mengalahkan Resistansi, termasuk secara tanpa pandangbulu menjadikan sasaran penduduk sipil; eksploitasi perpecahan di kalangan penduduk Timor-Leste; penggunaan pendekatan “represif” bukan “persuasif”; dan pengutamakan tujuan keamanan ketimbang kesejahteraan penduduk. Baik diarahkan pada konsentrasi

* Selain dari pertimbangan yang dijabarkan di bawah ini, bukti bahwa praktik yang serupa dengan yang diterapkan di Timor-Leste juga dijalankan di Indonesia akan relevan dengan penilaian bahwa ada tanggung jawab di tingkat tinggi. Komisi belum dapat menyelidiki permasalahan ini, tapi penelitian dari pihak-pihak lain mengenai masalah tersebut mengarah ke sana. Lihat, contohnya, Geoffrey Robinson, “People’s War: Militias in East Timor and Indonesia”, *South East Asia Research*, 9, 3, hal. 271 – 318.

besar penduduk, seperti pada akhir dasawarsa 1970-an, di mana penduduk menjadi sasaran pengeboman tak kenal ampun dan kemudian menyerah, ataupun diarahkan pada orang per orang anggota gerakan bawahan, seperti pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an, atau pada seluruh penduduk dalam kampanye untuk memenangkan integrasi pada 1999, asumsi strategisnya tidak berbeda.

Norma dan budaya kelembagaan

Komisi menganggap bermakna bahwa banyak individu yang ambil bagian dalam operasi-operasi dengan pelanggaran hak asasi manusia yang luas kemudian naik ke posisi tinggi dalam hierarki militer (lihat Lampiran 3 bab ini). Ini meliputi perwira-perwira yang ambil bagian dalam penyusupan-penyusupan yang mendahului invasi, dalam invasi itu sendiri, dalam operasi-operasi untuk menundukkan Resistansi pada akhir dasawarsa 1970-an, dalam pelaksanaan program “pemukiman kembali” yang menyebabkan kematian puluhan ribu orang yang menyerah dan tertangkap, dan dalam operasi-operasi yang bertujuan mencegah kebangkitan kembali Resistansi pada awal dasawarsa 1980-an. Komisi menemukan bahwa gejala ini penting karena beberapa hal. Ini merupakan indikasi lain dari impunitas angkatan bersenjata selama pendudukan mereka atas Timor-Leste, yang merupakan satu tema dari Laporan ini. Akan tetapi, hal ini juga memberikan penjelasan mengenai sikap perilaku orang-orang yang memimpin operasi-operasi tersebut dan yang memperoleh promosi sebagai hasil dari operasi-operasi tersebut.

Dengan latar belakang itu Komisi berpendapat bahwa, selain orang-orang yang secara perorangan bertanggung jawab atas kejahatan terhadap umat manusia dan kejahatan menurut hukum humaniter, sejumlah besar anggota tinggi hierarki militer Indonesia, yang terdiri atas orang-orang yang menduduki posisi yang memberikan otoritas pada mereka atas operasi-operasi di Timor-Leste pada 1975-1999, kemungkinan memenuhi syarat untuk pertanggungjawaban komando dan karena itu bisa dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada waktu itu.

Orang-orang tersebut kemungkinan memenuhi syarat yang relevan untuk pertanggungjawaban komando karena alasan-alasan berikut ini.

1) Ada hubungan atasan-bawahan

Walaupun untuk alasan-alasan yang dikemukakan secara ringkas di atas tidak selalu jelas bagi Komisi bagaimana dalam praktiknya garis komando beroperasi, jelas bahwa garis komando ini berkonvergensi di Jakarta pada diri Panglima Angkatan Bersenjata dan para bawahan terdekatnya, seperti Kepala Staf Umum, Asisten Operasi, Asisten Teritorial, Asisten Intelijen, dan Komandan kesatuan-kesatuan khusus seperti Kopassus dan Kostrad. Untuk sebagian besar periode pendudukan, Presiden Indonesia secara resmi dan dalam kenyataannya adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Bagian sipil pemerintah dan kepolisian berada di bawah Presiden dan Panglima Angkatan Bersenjata atau keduanya. Sementara atasan nominal semua instansi tersebut mungkin tidak

punya kontrol efektif atas bawahan nominal mereka, orang-orang yang memiliki otoritas harus diwajibkan menunjukkan bahwa dalam kenyataannya mereka tidak punya kontrol efektif.

2) Atasan “mengetahui atau punya alasan untuk mengetahui” bahwa suatu kejahatan akan atau sudah dilakukan

Pengakuan bahwa para atasan tidak mengetahui mengenai yang dilakukan oleh bawahan mereka di Timor-Leste sulit dipertahankan. Dalam sebagian kasus, yang paling jelas dalam periode sekitar pemungutan suara 1999, ketika keadaan dipantau dari dekat oleh orang luar, termasuk petugas-petugas PBB yang langsung memberi tahu perwira-perwira tinggi militer dan pejabat-pejabat tinggi sipil Indonesia mengenai keadaan di lapangan, pihak berwenang Indonesia setidaknya “punya alasan untuk mengetahui” bahwa kejahatan sedang dilakukan. Juga ada bukti dokumenter bahwa pada 1999 bawahan di lapangan mengirimkan laporan-laporan yang akurat kepada para atasan mengenai keadaan. Dalam tahun-tahun awal laporan-laporan seperti itu juga ada. Selain itu, sepanjang masa pendudukan, pemerintah-pemerintah, berbagai organisasi internasional, dan bermacam-macam organisasi nonpemerintah menyampaikan keprihatinan mereka dan keprihatinan pihak-pihak yang mereka wakili kepada pejabat-pejabat pemerintah dan komando militer Indonesia. Persoalannya bukanlah bahwa para pejabat dan perwira tinggi tidak tahu mengenai keadaan. Di masa kelaparan 1977-1979 penyampaian-penyampaian mereka diabaikan sebelum tujuan militer tercapai.

3) Pelaku gagal mengambil “tindakan yang diperlukan dan memadai untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut atau menghukum para pelakunya”

Seperti yang telah dikemukakan, ciri yang mencolok dari pendudukan Indonesia adalah impunitas yang diperoleh para anggota angkatan bersenjata. Temuan ini tidak dikurangi bobotnya oleh dua pengadilan yang diketahui telah dilakukan pada dasawarsa 1990-an, setelah Pembantaian Santa Cruz dan pembunuhan enam orang di Gariana (Maubara, Liquiçá) pada 1995. Kedua pengadilan itu adalah perkecualian yang tidak mengubah iklim impunitas umum, setidaknya karena pengadilan-pengadilan tersebut tidak mengangkat masalah pertanggungjawaban komando. Bisa dikemukakan bahwa kenyataan bahwa terjadi penurunan tingkat kekerasan pada masa pendudukan, dan bahwa sejak 1983 para tahanan diajukan ke pengadilan, memperlihatkan bahwa penguasa Indonesia telah mengambil “tindakan yang diperlukan dan memadai” untuk mengakhiri penggunaan cara-cara di luar hukum. Akan tetapi, penurunan kekerasan itu tidak berarti berakhirnya kekerasan, seperti yang paling dramatis diperlihatkan oleh Pembantaian Santa Cruz dan kejadian-kejadian 1999; sebagaimana diuraikan dalam Bab 7.6: Pengadilan Politik, sidang pengadilan dalam dua kasus tersebut menjadi senjata tambahan dalam gudang senjata represi dan tidak menandai berakhirnya jenis-jenis pelanggaran yang sudah biasa.

Pelanggaran hukum internasional oleh pasukan keamanan Indonesia

Pembunuhan dan penghilangan

Komisi percaya bahwa keterlibatan ABRI/TNI dalam pembunuhan tidak sah dan penghilangan melanggar berbagai ketentuan hukum internasional, yang menjadikan Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran ini. Secara khusus:

- Komisi berkesimpulan bahwa melalui pembantaian dan eksekusi penduduk sipil pada semua tahap konflik internasional ABRI/TNI bertanggung jawab atas pelanggaran salah satu prinsip fundamental hukum kebiasaan humaniter internasional, yaitu prinsip pembedaan yang melindungi penduduk sipil dari sasaran serangan. Tindakan ini juga melanggar Pasal 27 Konvensi Jenewa Keempat, yang ditandatangani Indonesia, yang mewajibkan perlakuan manusiawi kepada penduduk sipil, dan Pasal 32 Konvensi tersebut yang melarang pengambilan langkah apapun yang menyebabkan pembinasaaan penduduk sipil, termasuk pembunuhan.
- Lebih khususnya Komisi berkesimpulan bahwa penggunaan hukuman kolektif terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan massal, melanggar larangan kebiasaan tentang penggunaan serangan terhadap penduduk sipil, dan juga melanggar Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat yang mengatur ketentuan ini.
- Meskipun Indonesia, sebagai penguasa pendudukan, berhak memutuskan hukuman untuk tindakan kriminal, hukuman-hukuman tersebut, termasuk hukuman mati, harus diputuskan sesuai prinsip hukum dan setelah diadakan pengadilan yang layak oleh pihak pengadilan yang berwenang⁹ Indonesia tidak memenuhi kewajiban ini.
- Eksekusi tawanan perang oleh ABRI/TNI melanggar Pasal 13 Konvensi Jenewa Ketiga yang mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang dan melarang tindakan yang menyebabkan kematian tawanan perang di tahanan. Eksekusi tanpa pengadilan terhadap tawanan perang melanggar ketentuan Artikel 99 - 102 Konvensi Jenewa Ketiga yang menyatakan bahwa hukuman, termasuk hukuman mati, hanya boleh diberikan sesuai dengan prinsip hukum dan setelah diadakan pengadilan yang tidak disalahgunakan.
- Pembunuhan penduduk sipil dan petempur yang tertangkap oleh ABRI/TNI, di luar kasus-kasus di mana pembunuhan diizinkan oleh hukum humaniter internasional, merupakan pelanggaran hak hidup sang korban. Komisi menyatakan bahwa hak ini telah mendapatkan status sebagai hukum kebiasaan internasional jauh sebelum konflik dimulai.

Komisi juga menyatakan bahwa anggota ABRI/TNI secara pribadi yang terlibat dalam pembunuhan dan penghilangan terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan:

- Pembunuhan penduduk sipil secara sengaja selama konflik bersenjata internasional merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa Keempat, sesuai Pasal 147 Konvensi tersebut.

- Pembunuhan secara sengaja tawanan perang merupakan pelanggaran Konvensi Jenewa Ketiga, sesuai Pasal 130 Konvensi tersebut.
- Eksekusi penduduk sipil atau petempur musuh yang tertangkap dan penghilangan paksa merupakan pelanggaran berat hukum dan kebiasaan perang dan karena itu merupakan kejahatan perang menurut hukum kebiasaan internasional.
- Pembunuhan skala luas dan sistematis, pembinasaaan, atau penghilangan paksa anggota penduduk sipil merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisi berkesimpulan bahwa tindakan ini dilakukan di Timor-Leste dalam skala luas dan sistematis oleh ABRI/TNI selama konflik.

Penahanan

Komisi menyatakan bahwa praktik yang digunakan TNI untuk menahan penduduk sipil dan petempur musuh yang tertawan, dan cara perlakuan terhadap tahanan tersebut selama dalam tahanan, melanggar hukum internasional dan hukum hak asasi manusia.

- Meski sebagai pihak yang terlibat dalam konflik internasional dan penguasa pendudukan ABRI/TNI berhak mengambil langkah pengamanan yang diperlukan, Komisi menyatakan bahwa penahanan penduduk sipil yang tidak perlu untuk pengamanan melanggar hak kebiasaan para tahanan untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang.
- Bagaimanapun juga penyiksaan dan penganiayaan terhadap penduduk sipil oleh ABRI/TNI, baik dengan alasan penahanan yang sah atau tidak, melanggar ketentuan Konvensi Jenewa Keempat yang mengikat Indonesia. Pasal 27 Konvensi mewajibkan perlakuan yang manusiawi terhadap penduduk sipil. Pasal 31 menyatakan bahwa tidak boleh ada paksaan fisik atau moral terhadap penduduk sipil, termasuk untuk memperoleh informasi. Pasal 32 melarang Indonesia dan ABRI/TNI mengambil langkah yang mengakibatkan penderitaan fisik penduduk sipil termasuk penyiksaan, hukuman fisik, dan mutilasi.
- Selain itu, apabila penduduk sipil ditahan, mereka harus diperlakukan secara manusiawi, dan ini mencakup kondisi penahanan mereka. Ini diwajibkan dalam Pasal 37 Konvensi Jenewa Keempat, yang menyatakan bahwa penduduk sipil yang ditahan untuk proses kriminal harus dipelakukan secara manusiawi, dan juga oleh hukum kebiasaan hak asasi manusia. Komisi menyatakan bahwa dalam banyak kasus ABRI/TNI terlibat dalam pelanggaran prinsip-prinsip ini dengan menyediakan tempat penahanan yang sangat tidak layak bagi mereka yang ditahan.
- Demikian juga, meski petempur musuh yang tertangkap bisa ditahan, mereka harus diperlakukan secara manusiawi dan berada dalam kondisi penahanan yang memadai. Dalam kaitannya dengan tawanan perang, hal tersebut diwajibkan oleh berbagai ketentuan Konvensi Jenewa Ketiga, termasuk Pasal

21 dan Bab II Konvensi. Dalam kaitannya dengan petempur yang tertangkap yang tidak berhak atas status tawanan perang, hukum kebiasaan hak asasi manusia bagaimanapun juga menyatakan bahwa kondisi penahanan harus manusiawi. Komisi menyatakan bahwa TNI melanggar kewajiban ini dengan menahan banyak petempur dalam kondisi yang sangat menyedihkan.

Penyiksaan dan penganiayaan

Komisi berkesimpulan bahwa ABRI/TNI bertanggung jawab atas penyiksaan dan penganiayaan dalam skala luas terhadap petempur musuh yang tertangkap dan orang yang bukan petempur yang jelas melanggar hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia.

- Dalam kaitannya dengan tawanan perang, Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa tawanan perang harus selalu diperlakukan secara manusiawi; mereka tidak boleh menjadi sasaran mutilasi fisik dan tindak kekerasan atau intimidasi (Pasal 13) atau penyiksaan fisik atau mental atau bentuk-bentuk paksaan lain untuk menarik informasi (Pasal 17). Larangan ini dilanggar setiap saat pejuang Falintil dianiaya secara fisik di tangan ABRI/TNI.
- Dalam kaitannya dengan petempur lawan yang tidak berhak mendapat status tawanan perang maka orang tersebut bisa diadili, tetapi, menurut hukum kebiasaan perang dan Pasal 5 Konvensi Jenewa Keempat, harus diperlakukan dengan manusiawi dan tidak dihukum kecuali setelah melalui proses pengadilan yang adil. Komisi berkesimpulan bahwa bahkan pada saat seorang yang tertawan tidak berhak atas status tawanan perang, ABRI/TNI bagaimanapun juga memikul tanggung jawab atas perlakuan buruk apapun terhadap orang tersebut.
- Bagaimanapun juga prinsip hak asasi manusia yang menjamin bagi semua orang hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan berlaku tanpa pandang bulu, tak peduli apapun status tahanannya ataupun apakah ada persoalan keamanan. Komisi menyatakan bahwa prinsip ini merupakan bagian hukum kebiasaan internasional selama periode mandat dan secara sistematis dan rutin dilanggar oleh ABRI/TNI.

Akhirnya Komisi juga menyatakan bahwa ada dasar kuat untuk menyimpulkan bahwa anggota ABRI/TNI yang secara pribadi terlibat dalam penahanan dan penganiayaan penduduk sipil dan anggota Falintil yang tertangkap bertanggung jawab atas tindakan mereka. Alasan dibuatnya kesimpulan ini adalah:

- Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap penduduk sipil merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa Keempat, sesuai Pasal 147 Konvensi.
- Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa Ketiga, sesuai Pasal 130 Konvensi.

- Penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan dalam konteks konflik bersenjata internasional merupakan pelanggaran berat hukum dan kebiasaan perang dan karena itu merupakan kejahatan perang menurut hukum internasional tanpa membedakan apakah dilakukan terhadap penduduk sipil, tawanan perang, atau petempur yang tidak mempunyai hak.
- Tindak penyiksaan atau penganiayaan dalam skala luas dan sistematis yang dilakukan terhadap penduduk sipil bisa dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisi berkesimpulan bahwa penggunaan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan oleh ABRI/TNI terhadap penduduk Timor berskala luas dan sistematis. Karena itu ada dasar kuat untuk menyatakan bahwa anggota ABRI secara pribadi memikul tanggung jawab kriminal menurut hukum internasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pelanggaran seksual

Komisi menyatakan bahwa ABRI/TNI bertanggung jawab atas banyak pelanggaran hukum internasional melalui tindak perkosaan, perbudakan seksual, dan pelanggaran seksual lain.

Komisi berkesimpulan bahwa dalam melakukan dan membiarkan tindak perkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan Timor, ABRI/TNI melanggar ketentuan Konvensi Jenewa Keempat, yang berlaku terhadap Indonesia. Pasal 27 Konvensi mewajibkan perlakuan manusiawi penduduk sipil. Pasal ini menyatakan bahwa perempuan harus secara khusus diberi perlindungan dari pelecehan-pelecehan martabat mereka termasuk perkosaan, prostitusi paksa, atau bentuk-bentuk pelecehan lain.

Selain itu Pasal 31 menyatakan adanya larangan terhadap penggunaan pemaksaan fisik maupun moral terhadap penduduk sipil, termasuk untuk mendapatkan informasi. Pasal 32 melarang Indonesia dan ABRI/TNI mengambil langkah yang menyebabkan penderitaan fisik penduduk sipil.

Dengan melakukan dan membiarkan kekerasan seksual, ABRI/TNI melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.

Selain itu, perkosaan dan pelecehan seksual merupakan bentuk penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan. Komisi berkesimpulan bahwa dengan melakukan dan membiarkan orang lain melakukan bentuk kegiatan ini ABRI/TNI melanggar hak korban untuk bebas dari penyiksaan atau penganiayaan.

Insiden perbudakan seksual, yang dicirikan oleh diterapkannya sebagian atau seluruh kekuasaan yang berkaitan dengan hak milik atas seseorang, melanggar larangan dasar perbudakan menurut hukum kebiasaan internasional.

Komisi juga menyatakan bahwa setiap anggota ABRI/TNI memikul tanggung jawab kriminal atas keterlibatan mereka dalam pelanggaran seksual selama konflik.

- Tindakan perkosaan terhadap perempuan sipil Timor merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa Keempat, sesuai Pasal 147 Konvensi tersebut.
- Perkosaan merupakan pelanggaran berat hukum dan kebiasaan perang dan karena itu merupakan kejahatan perang menurut hukum kebiasaan internasional, paling tidak selama paruh akhir periode mandat.
- Apabila insiden perbudakan seksual atau perkosaan atau pelanggaran seksual lainnya yang merupakan tindakan tidak manusiawi, dilakukan sebagai bagian dari serangan skala besar dan sistematis terhadap penduduk sipil maka kejahatan terhadap kemanusiaan sudah terjadi. Komisi berkesimpulan bahwa ada dasar kuat untuk menyimpulkan bahwa sepanjang periode konflik ABRI/TNI melakukan serangan-serangan skala besar dan sistematis terhadap penduduk sipil Timor, dan karena itu mereka yang terlibat dalam pelanggaran seksual sebagai bagian dari serangan-serangan tersebut harus memikul tanggung jawab kriminal secara pribadi atas tidak kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan yang tidak adil

Komisi menyimpulkan bahwa pengadilan yang dilakukan selama pendudukan Indonesia mempunyai banyak kelemahan substantif dan prosedural. Dalam banyak kasus, ini membuat Indonesia melanggar kewajiban internasionalnya menurut Konvensi Jenewa dan hukum kebiasaan internasional. Komisi menyatakan bahwa ketentuan berikut dilanggar oleh Indonesia selama mengadili penduduk sipil:

- Pasal 64 Konvensi Jenewa Keempat mewajibkan Indonesia, sebagai penguasa pendudukan, untuk tidak mengubah hukum kriminal yang ada di wilayah yang diduduki kecuali untuk memelihara keamanan, dan untuk membiarkan pengadilan yang ada berfungsi.
- Pasal 71 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa hukuman tidak seharusnya diputuskan untuk suatu tindakan kriminal kecuali setelah ada proses hukum yang layak. Tertuduh harus diberi tahu secepatnya dalam bahasa yang mereka pahami mengenai dakwaan terhadap mereka.
- Pasal 72 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa tertuduh berhak mengajukan bukti dan dibantu oleh pengacara yang kompeten yang mereka pilih sendiri yang memiliki fasilitas yang layak untuk mempersiapkan pembelaan, termasuk bisa mengunjungi terdakwa.
- Pasal 72 Konvensi Jenewa Keempat juga menyatakan bahwa tertuduh harus diberi kesempatan untuk dibantu oleh seorang penerjemah, dan hak untuk mengajukan keberatan terhadap penerjemah dan meminta seorang penerjemah baru.

- Pasal 73 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa semua orang yang dihukum harus mempunyai hak untuk banding dan harus diberi informasi sepenuhnya mengenai hak mereka.

Dalam kaitannya dengan pengadilan petempur yang tertangkap yang berhak atas status tawanan perang, Komisi berkesimpulan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran berbagai ketentuan yang sama, termasuk berikut ini:

- Pasal 84 Konvensi Jenewa Ketiga menyatakan bahwa tawanan perang tidak boleh diadili dengan alasan apapun oleh pengadilan yang tidak memberikan jaminan kemandirian dan ketidakberpihakan.
- Pasal 105 Konvensi Jenewa Ketiga menyatakan bahwa, saat diadili, tawanan perang berhak mengajukan bukti dan mendapat akses kepada pengacara yang kompeten yang merupakan pilihan mereka dan seorang penerjemah jika perlu. Pengacara tertuduh harus diberi fasilitas yang layak untuk menyiapkan pembelaan dan bisa mengunjungi tertuduh.
- Pasal 106 menyatakan bahwa jika divonis tawanan perang berhak mengajukan banding atas putusan atau vonis pengadilan.

Selain itu Komisi berkesimpulan bahwa dalam banyak kasus, penyiksaan atau perlakuan buruk digunakan untuk mendapatkan pengakuan atau bukti yang kemudian dipakai di pengadilan. Pemakaian bukti semacam ini merupakan pelanggaran larangan kebiasaan mengenai penyiksaan dan ketentuan Konvensi Jenewa yang melarang pemakaian penyiksaan untuk mendapatkan informasi (lihat di atas, segmen “penyiksaan dan penganiayaan”).

Pelanggaran terhadap anak

Komisi menyimpulkan bahwa berbagai pelanggaran dilakukan terhadap anak-anak Timor. Banyak pelanggaran ini mencerminkan pelanggaran terhadap orang dewasa: misalnya pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penganiayaan, serta pelanggaran seksual. Dalam kaitannya dengan pelanggaran tersebut Komisi menyatakan bahwa ABRI/TNI dan Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran prinsip yang sama dari hukum internasional yang dijelaskan di atas. Namun demikian, tanggung jawab lebih lanjut juga menumpuk dalam banyak kasus karena status korban sebagai anak.

Konvensi Jenewa Keempat mewajibkan agar perlakuan khusus diberikan kepada anak-anak selama konflik bersenjata internasional dan di wilayah yang diduduki. Konvensi ini mewajibkan, dalam Pasal 24 dan 50, perawatan dan perlindungan khusus terhadap anak yatim atau yang terpisahkan akibat konflik. Yang paling penting, Konvensi ini melarang penguasa pendudukan untuk merekrut anak-anak ke dalam organisasi yang berada di bawah naungannya (Pasal 50) dan memaksa anak bekerja (Pasal 51). Komisi menyatakan bahwa ABRI/TNI melanggar ketentuan-ketentuan tersebut secara teratur dan sistematis, karena tidak memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang terkena dampak konflik di wilayah pendudukan Timor-Leste, dan juga secara aktif merekrut anak-anak untuk dijadikan TBO dan menjalankan peran-peran lainnya.

Selain itu, Komisi mencatat bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 5 September 1990. Setelah menjadi penandatanganan Konvensi tersebut, Indonesia terikat hukum internasional untuk memenuhi ketentuan-ketentuannya. Namun demikian Komisi berkesimpulan bahwa banyak ketentuan Konvensi ini dilanggar dengan tindakan ABRI/TNI di Timor-Leste. Komisi menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran ketentuan Konvensi berikut selama dekade 1990-an:

- Pasal 6, yang menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak asasi atas hidup dan mewajibkan Indonesia menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak secara maksimal
- Pasal 13, yang menjamin hak anak atas kebebasan berekspresi
- Pasal 14, yang menjamin hak anak atas kebebasan hati nurani dan beragama
- Pasal 15, yang menjamin hak anak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai
- Pasal 37, yang menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau penganiayaan lainnya atau penahanan sewenang-wenang, bahwa anak-anak yang kehilangan kebebasan mereka harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan mempertimbangkan usia mereka, dan harus diberi akses kepada proses hukum untuk mempertanyakan penahanan mereka di pengadilan
- Pasal 19, yang mewajibkan negara mengambil langkah untuk melindungi anak-anak dari semua jenis kekerasan atau eksploitasi fisik atau mental
- Pasal 34, yang mewajibkan negara mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan penganiayaan.
- Pasal 36, yang mewajibkan Indonesia untuk melindungi anak-anak dari semua jenis eksploitasi lain.

Komisi berkesimpulan bahwa, secara khusus, pemindahan anak-anak Timor ke Indonesia selama dekade 1990-an melibatkan pelanggaran berbagai ketentuan khusus Konvensi Hak Anak, termasuk berikut ini:

- Pasal 8, yang mewajibkan Indonesia menghargai hak setiap anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga
- Pasal 9, yang menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh dipisah dari orangtua tanpa persetujuan mereka kecuali jika pihak berwenang menentukan bahwa hal ini dilakukan untuk kepentingan anak dan harus ditinjau secara hukum
- Pasal 11, yang menyatakan bahwa Indonesia harus mengambil langkah untuk menghentikan pemindahan tidak sah dan dibawanya anak ke luar negeri
- Pasal 20, yang menyatakan bahwa di mana anak dipisah dari keluarga mereka, negara harus memberi perlindungan khusus, yang rinciannya ditentukan berdasar pertimbangan kelanjutan perkembangan anak, dan latar belakang etnis, agama, budaya, dan bahasa.
- Pasal 21, yang menyatakan bahwa adopsi anak harus diatur.

Pemanfaatan anak dalam kelompok binaan oleh Indonesia juga melanggar ketentuan Konvensi:

- Pasal 32 mewajibkan Indonesia melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan melakukan kegiatan yang berbahaya atau menghambat pendidikan atau perkembangan mereka.
- Pasal 38 mewajibkan Indonesia melakukan segala langkah yang mungkin untuk mencegah anak-anak di bawah usia 15 tahun terlibat pertempuran, dan untuk tidak merekrut anak-anak di bawah 15 tahun.

Secara lebih umum, Komisi berkesimpulan bahwa Indonesia tidak melakukan upaya apapun untuk memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 3(1) Konvensi untuk mengutamakan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan anak-anak.

Pemindahan dan kelaparan

Komisi percaya bahwa Indonesia melanggar kewajibannya sesuai hukum humaniter internasional dengan memindahkan dan menyebabkan kelaparan berat dengan cara-cara berikut:

- Dengan memindah desa-desa, Indonesia melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat yang melarang penguasa pendudukan untuk secara paksa memindah penduduk sipil kecuali untuk tujuan mengosongkan suatu daerah untuk keselamatan penduduk sipil atau jika diperlukan untuk alasan militer.
- Dengan tidak memberi makanan yang mencukupi di kamp-kamp permukiman dan desa-desa permukiman Indonesia lebih jauh melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat yang menyatakan bahwa di mana penduduk sipil dipindah atau dievakuasi oleh penguasa pendudukan mereka harus diberi akomodasi yang layak dan kondisi kesehatan lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan gizi yang memuaskan.
- Dengan menahan anggota keluarga atau masyarakat dari orang-orang yang dicurigai melakukan kegiatan resistansi, dan bukannya terbatas pada orang yang benar-benar merupakan ancaman keamanan, Indonesia melanggar Pasal 42 Konvensi Jenewa Keempat yang menyatakan bahwa orang hanya ditahan apabila keamanan penguasa yang menahan benar-benar terancam.
- Karena tidak memberi makanan yang memadai kepada orang-orang yang ditahan, Indonesia melanggar Pasal 89 Konvensi Jenewa Keempat yang mewajibkan disediakannya makanan yang cukup yang memungkinkan tahanan menjaga kesehatan.
- Dengan menggunakan taktik yang menghancurkan makanan dan sumber makanan penduduk sipil untuk membuat mereka kelaparan agar mereka menyerah dan mencegah mereka mendukung Resistansi, Indonesia melanggar prinsip kebiasaan yang tertuang dalam Pasal 54 Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa, yang melarang kelaparan penduduk

sebagai cara perang dan serangan atau penghancuran sasaran yang penting untuk kelangsungan hidup penduduk sipil seperti makanan dan persediaan makanan atau menjadikan ini sebagai sasaran dalam serangan balasan.

- Komisi juga berpandangan bahwa mereka yang terlibat dalam lembaga sipil dan militer Indonesia juga terlibat dalam tindak kejahatan internasional berkaitan dengan pemindahan dan kelaparan.
- Komisi berkesimpulan bahwa ada dasar kuat yang menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam pemindahan tidak sah dan penahanan penduduk sipil melakukan pelanggaran berat Konvensi Jenewa Keempat, seperti tertuang dalam Pasal 147.
- Komisi juga berkesimpulan bahwa ada dasar kuat yang menunjukkan bahwa mereka yang menyusun kebijakan yang membuat penduduk sipil kehilangan sumber makanan agar mereka menyerah dan melemahkan dukungan terhadap Falintil, melakukan pelanggaran berat Konvensi Jenewa Keempat dengan sengaja menyebabkan penderitaan hebat atau luka parah baik fisik maupun mental terhadap penduduk sipil, seperti tertuang dalam Pasal 147 Konvensi Jenewa.
- Komisi juga menyimpulkan bahwa ada dasar kuat yang menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam penghancuran secara sengaja makanan dan sumber makanan penduduk sipil melakukan pelanggaran berat hukum dan kebiasaan perang yang berarti juga melakukan tindak kejahatan perang.
- Akhirnya, Komisi berpandangan bahwa ada alasan kuat yang menunjukkan bahwa personel tertentu dalam militer Indonesia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu pembinasaaan. Komisi berkesimpulan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan militer Indonesia yang dijelaskan di atas memenuhi syarat sebagai pembinasaaan* yang dilakukan sebagai bagian dari serangan berskala luas dan sistematis terhadap penduduk sipil Timor-Leste. Komisi berkesimpulan bahwa mereka yang merancang dan melaksanakan kebijakan yang dijelaskan di atas melakukan tindakan tersebut secara sengaja dan dengan pemahaman penuh. Bagaimanapun, Komisi berkesimpulan bahwa mereka yang memegang posisi komando dalam militer Indonesia dan pemerintahan sipil pasti mengetahui tentang tindakan yang dilakukan bawahan mereka, tetapi tidak mengambil tindakan apapun untuk mencegah atau menghukum para bawahan tersebut. Berdasar hal ini Komisi berkesimpulan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan dengan menciptakan kelaparan di antara rakyat Timor.

* Statuta dalam Pengadilan Kriminal Internasional mendefinisikan 'pembinasaaan' sebagai pemaksaan kondisi kehidupan, antara lain, dengan tidak memberi makanan dan obat-obatan, yang diperhitungkan akan menimbulkan penghancuran sebagian atau seluruh penduduk. Pembinasaaan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum kebiasaan internasional sejak paling tidak Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg.

Pelanggaran hukum perang

Selain contoh-contoh yang dikutip di atas, pasukan keamanan Indonesia juga bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional yang mengatur perilaku perang dalam ketentuan-ketentuan yang sangat terperinci.

Ini termasuk hak berikut:

Komisi berkesimpulan bahwa komandan senior pasukan keamanan Indonesia saat itu dan Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran prinsip fundamental hukum humaniter internasional yang menyatakan bahwa penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer selama pertempuran.

Komisi berkesimpulan bahwa komandan senior pasukan keamanan Indonesia pada saat itu dan pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran prinsip hukum dan kebiasaan perang yang melarang serangan militer yang membabitnya dan berlebihan. Komisi juga menyimpulkan bahwa pasukan keamanan Indonesia melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum dan kebiasaan perang, yang tertuang dalam Pasal 26 Regulasi tambahan Konvensi Den Haag 1907, untuk memberi tahu akan adanya serangan. Komisi berkesimpulan bahwa komandan senior pasukan keamanan Indonesia pada saat itu dan Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran prinsip hukum dan kebiasaan perang yang melarang penghancuran secara langsung dan sengaja harta benda penduduk sipil, dan juga bertanggung jawab atas pelanggaran Pasal 53 Konvensi Jenewa Keempat yang melarang penguasa pendudukan menghancurkan harta benda kecuali bila benar-benar perlu untuk tujuan militer.

Komisi menyatakan bahwa pasukan keamanan Indonesia juga melanggar larangan perampok yang tertuang dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat.

Komisi berkesimpulan bahwa penggunaan zat kimia oleh pasukan keamanan Indonesia untuk meracuni persediaan makanan dan air melanggar larangan kebiasaan yang tertuang dalam Pasal 23(a) Regulasi tambahan dalam Konvensi Den Haag Keempat 1907 mengenai penggunaan racun.

Komisi menyatakan bahwa penggunaan napalm dan alat-alat pembakar oleh pasukan keamanan Indonesia melanggar larangan kebiasaan mengenai pemakaian senjata yang mengakibatkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

Komisi menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan pasukannya melanggar Pasal 51 Konvensi Jenewa Keempat yang melarang penguasa pendudukan memaksa penduduk sipil bertugas dalam militernya atau kelompok binaannya, dan menggunakan tekanan atau propaganda untuk merekrut; dan peraturan kebiasaan yang tecermin dalam Pasal 23 regulasi tambahan Konvensi Den Haag Keempat 1907 yang melarang penguasa pendudukan untuk memaksa warga negara musuh untuk ikutserta dalam operasi perang yang ditujukan kepada warga negaranya sendiri.

Hak ekonomi dan sosial

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menyatakan bahwa karena negara-negara berada dalam tahapan pembangunan ekonomi yang berbeda, negara tidak sama dalam kemampuan mereka untuk memenuhi hak-hak yang dituangkan dalam kovenan. Negara berkewajiban mengambil langkah untuk memenuhi hak sosial dan ekonomi secara bertahap semaksimal mungkin yang dapat dijangkau dengan sumberdayanya. Namun demikian, pada saat yang sama, negara punya tanggung jawab utama, yang harus mereka penuhi. Ini termasuk tanggung jawab untuk memberikan kebutuhan dasar tertentu, seperti pangan, papan, obat-obatan esensial, dan pendidikan dasar. Negara juga diwajibkan tidak bertindak secara diskriminatif dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial dan mereka tidak mengambil tindakan regresif (mundur) yang mengakibatkan kemampuan orang untuk mendapatkan hak-hak ini menciut. Komisi percaya bahwa Indonesia melanggar hak ekonomi dan sosial di segala tingkatan.

Dalam banyak kasus negara mengambil langkah pengamanan yang sangat keras yang tidak sesuai dengan kewajiban utamanya, dan yang mempunyai dampak regresif (membuat keadaan kembali buruk) dan bersifat diskriminatif. Misalnya hak-hak yang dilanggar sebagai akibat tindakan dan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- Hak atas kesehatan (Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya [ICESCR], Pasal 24 Kovenan tentang Hak Anak [CRC]) dilanggar dalam tahanan politik dan melalui penggunaan siksaan dan kondisi mengenaskan kamp-kamp permukiman. Pada 1999 TNI dan milisi menghancurkan 77% fasilitas kesehatan dan hampir semua peralatan medis dan obat-obatan dirampas dan dihancurkan.¹⁰
- Hak atas pendidikan (Pasal 13 ICESCR, Pasal 26 UNDHR, Pasal 28-29 CRC) dilanggar bagi mereka yang dipaksa masuk kamp-kamp permukiman dan diwajibkan bertugas di militer sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO).
- Hak untuk memilih pekerjaan (Pasal 6 ICESCR, Pasal 23 UDHR, Pasal 8[3a] Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik [ICCPR], Pasal 32, 38[2] CRC) dilanggar dengan perekrutan paksa ke dalam operasi militer sebagai TBO, milisi sipil atau tameng hidup dan kerja paksa lainnya.
- Hak atas Perumahan (Pasal 11 ICESCR, Pasal 25 UDHR) dilanggar melalui pengusiran paksa dan penghancuran rumah secara massal.
- Hak atas standar hidup yang layak (Pasal 11 ICESCR, Pasal 25 UDHR, Pasal 27 CRC) dilanggar melalui pemindahan penduduk sipil ke kamp-kamp penahanan yang tidak memadai.
- Hak rakyat Timor untuk mengelola kekayaan dan sumberdaya alam (Pasal 1 [2] ICESCR, Pasal 1[2] ICCPR) dilanggar dengan secara paksa mengambil berbagai komoditi pertanian dan sumberdaya alam, termasuk kopi, kayu cendana, dan jenis kayu lain. Perjanjian Kerjasama Celah Timor yang

ditandatangani Indonesia dan Australia membagi sumur minyak dan gas yang berlimpah tanpa melibatkan atau mempertimbangkan kepentingan rakyat Timor.

Pada saat yang sama Komisi berkesimpulan bahwa sekali lagi terutama karena keamanan merupakan tujuan utamanya, Negara Indonesia tidak memberikan hak sosial dan ekonomi rakyat Timor semaksimal mungkin. Jadi, program investasinya di wilayah ini sangat berat sebelah ke sektor-sektor seperti transportasi dan komunikasi serta administrasi negara, yang bisa secara langsung meningkatkan keamanan, dengan mengabaikan sektor-sektor lain, seperti pertanian dan kesehatan, yang bisa memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu Komisi menerima banyak bukti bahwa dana yang dialokasikan untuk sektor-sektor seperti kesehatan dan pendidikan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Timor karena beberapa alasan, termasuk konteks yang sangat militeristik di mana program ini dilaksanakan.

Akhirnya, kemajuan ekonomi apapun yang dibuat selama pendudukan hampir semuanya hancur akibat penghancuran menyeluruh setelah Jajak Pendapat pada 1999 oleh TNI dan kelompok milisi, termasuk aset seperti bangunan pemerintah, proyek irigasi, sampai pembangkit listrik yang dibangun negara Indonesia. Untuk menjelaskan pesta kekerasan ini sebagai “keadaan yang memburuk” jelas sangat tidak memadai karena skalanya dan tujuannya yang jahat. (Lihat Bab 7.9: Hak Ekonomi dan Sosial)

Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai politik Timor

Saya menggagas gerakan 11 Agustus [tahun 1975]... tidak ada kontrol. Siapa yang salah? Saya salah. Saya terima ini. Kalian tidak perlu mencari banyak orang untuk disalahkan. Banyak orang terbunuh... Kami lupa tanggung jawab paling besar kami...Saya melakukan kesalahan, karena saya tidak memahami orang Timor.

Penting agar kita mempunyai toleransi dalam hati kita, rekonsiliasi di hati kita. Saya tidak percaya bahwa rakyat Timor akan mengambil tindakan sendiri... Kalau kita menyadari (kesalahan kita), kita tidak akan lupa untuk memaafkan...Kita harus melihat ke masa lalu, untuk melihat siapa yang salah, siapa yang melakukan hal-hal yang jelek, tetapi menganalisa ini dengan satu tujuan—agar di masa depan kita memahami apa yang buruk dan tidak mengulang hal tersebut.

João Carrascalão, kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003 (berbicara dalam kapasitas sebagai Presiden UDT)

Saya katakan bahwa pembantaian oleh Fretilin [di Aileu dan Same], Fretilin sebagai organisasi harus memikul tanggung jawab...Fretilin sebagai organisasi harus memikul tanggung jawab...dan saya tidak lari dari tanggung jawab...Saat saya mendengar orang yang datang ke saya mengatakan “saudaraku, bapakku, keluargaku dibunuh Fretilin yang menuduh mereka pengkhianat. Apakah kita sekarang pengkhianat atau tidak? Kami ingin tahu ini.” Kalau kita mendengar hal ini...kita tahu kita harus menyelesaikan hal ini, karena hal ini tidak bisa dibiarkan.

Mari Alkatiri, kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003 (berbicara dalam kapasitas pribadi sebagai Aktor Sejarah).

Persoalan tanggung jawab atas merebaknya permusuhan selama periode konflik internal di Timor-Leste pada 1975 adalah rumit karena berbagai alasan:

- Setelah Revolusi Anyelir sejumlah faktor membuat tidak efektifnya Pemerintahan Portugis yang silih berganti dan berpengaruh dalam upaya menangani masalah Timor-Leste: politik di Portugal cepat berubah dan tidak stabil, termasuk pada saat kritis selama periode menjelang invasi Indonesia ke Timor-Leste; banyak pusat kekuatan yang saling bersaing di Lisabon yang tidak mampu mengembangkan kebijakan yang mantap mengenai masa depan wilayah ini; dan pergantian pemerintahan yang tampil setelah revolusi melihat dekolonisasi wilayah Afrika Portugal sebagai tanggung jawab utama. Meskipun Portugal akhirnya merancang suatu jadwal yang diterima luas untuk dekolonisasi Timor-Leste, semua faktor ini berperan dalam kemandulan Pemerintah Portugis untuk melakukan tindakan pada waktu yang tepat. Lebih jauh, Pemerintah Portugis tidak sungguh-sungguh berusaha untuk memperkuat posisinya yang lemah terhadap Indonesia dengan membuat komitmen yang kuat kepada prinsip penentuan nasib sendiri atau dengan mengambil langkah untuk menginternasionalisasi persoalan ini.
- Akibat berabad-abad berada di bawah pemerintahan yang sewenang-wenang dan larangan rakyat Timor untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, salah satu warisan kolonial Portugis adalah lemahnya penghargaan terhadap supremasi hukum dan lembaga negara yang tidak berkembang.
- Berbagai faktor menghambat kemampuan tentara kolonial untuk melakukan intervensi. Ini termasuk: semangat yang rendah di antara tentara Portugis di wilayah ini; berkurangnya jumlah pasukan; tekad agar tidak ada pertumpahan darah di koloni ini; ambivalensi tentara dan orang-orang tentang prinsip netralitas politik pada saat perang kolonial di Afrika dan revolusi di Portugal berdampak membuat radikal angkatan bersenjata Portugis dan memolitisasi tentara wamil Timor dan tentara reguler.

- Kurangnya pengalaman politik dari para pemimpin Fretilin dan UDT tidak memungkinkan mereka melihat bahaya akan pecahnya kekerasan dan perlunya menemukan kesepakatan. Sebaliknya para pemimpin partai politik yang masih muda menggunakan retorika kekerasan terhadap lawan politik mereka dan mendorong anggota mereka menggunakan kekerasan fisik.
- Tidak adanya lembaga kunci, termasuk lembaga masyarakat sipil dan media yang independen, ketidakmampuan LSM, juga Gereja Katolik, untuk berposisi di atas semua kekuatan politik berarti bahwa bahkan apabila mereka memainkan peran apapun, mereka hanya akan memperburuk situasi bukannya menenangkan situasi.
- Peran Indonesia dalam menciptakan destabilisasi di Timor Portugis pada 1974 melalui serangkaian tindakan termasuk membantu Apodeti dan memanipulasi politik internal melalui kontaknya dengan unsur-unsur kepemimpinan UDT, meningkatkan ketegangan lebih lanjut.
- Karena berbagai alasan, di mana yang paling utama adalah keinginan untuk tidak mengasingkan Indonesia, semua aktor internasional dan regional yang bisa mengekang Indonesia menolak memberikan peringatan kuat bahwa pengambilalihan secara paksa Timor Portugis merupakan pelanggaran prinsip penentuan nasib sendiri dan tidak bisa diterima.

Semua faktor ini membantu terciptanya situasi yang sangat tidak stabil dan tidak terkendali pada Agustus 1975. Namun demikian, Komisi berkesimpulan bahwa UDT bertanggung jawab karena sangat mengubah situasi tersebut saat UDT melancarkan gerakan bersenjata pada 11 Agustus 1975.

Gerakan bersenjata ini memperkenalkan kekerasan bersenjata dalam skala besar sebagai unsur dalam konflik politik yang mendorong reaksi dari Fretilin. Gerakan ini secara pasti menghentikan harapan yang sudah tipis bahwa rencana dekolonisasi Portugis bisa berjalan. Akhirnya, kekalahan UDT saat Fretilin melancarkan pemberontakan bersenjata memaksa para pemimpinnya melintas batas ke wilayah Timor Barat Indonesia di mana mereka mendukung tujuan Indonesia. Lebih jauh serangkaian kejadian ini memberi Pemerintah Indonesia alasan untuk melakukan intervensi, sehingga memungkinkan Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa mereka melakukan ini untuk menyelesaikan konflik di antara orang Timor yang mengancam stabilitas regional.

Dampak akhir dari penggunaan kekerasan adalah kematian ribuan orang Timor, dan perpecahan penduduk yang dampaknya masih ada sampai sekarang. ICRC melaporkan bahwa total 3.000 orang terbunuh selama periode utama “perang sipil” yang penuh kekerasan.

Meskipun Fretilin melancarkan pemberontakan umum sebagai tanggapan atas tindakan tidak sah UDT, Komisi berkesimpulan bahwa anggota Fretilin yang terlibat dalam pemberontakan bertanggung jawab atas pembunuhan tidak sah dan pelanggaran lain yang jauh lebih banyak jumlahnya dengan sasaran penduduk sipil, tahanan, orang sakit dan terluka, dibanding yang dilakukan selama gerakan bersenjata

UDT.

Anggota partai Apodeti, KOTA, dan Trabalhista memikul tanggung jawab bersama atas invasi Timor-Leste oleh Indonesia melalui tindakan politik mereka dengan menandatangani Deklarasi Balibó dan dengan keterlibatan mereka sebagai pasukan ‘Partisan’ dalam invasi Indonesia ke Timor-Leste.

Tanggung jawab dan pertanggungjawaban Fretilin/ Falintil

Komisi menerima laporan lebih daripada 5.000 pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota Fretilin/Falintil selama periode konflik dari tahun 1974 sampai tahun 1999.

Pembunuhan di luar hukum

Para saksi dan korban pelanggaran mengidentifikasi anggota Fretilin/Falintil sebagai pelaku dalam separuh dari semua laporan mengenai pembunuhan tidak sah penduduk sipil sepanjang 1975, termasuk oleh ABRI dan kelompok binaannya. Angka ini menurun drastis menjadi sekitar 16% selama periode yang termasuk pembersihan internal, 1976-84. Pada tahun-tahun berikutnya proporsi dari semua pembunuhan tidak sah yang dilaporkan yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil turun tajam, menjadi sekitar 4% selama 1985-1998.*

Selama terjadinya kekerasan massal pada 1999 kurang dari 1% dari semua eksekusi yang dilaporkan ke Komisi dilakukan oleh anggota Fretilin/Falintil. Persentase pembunuhan tidak sah yang sangat kecil yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil pada 1999 konsisten dengan informasi kualitatif yang diterima Komisi tentang tanggapan strategis Falintil terhadap kekerasan milisi dan TNI. Komandan Falintil, Xanana Gusmão, memerintahkan pasukannya untuk tidak membalas serangan milisi dan TNI, dan pada awal Agustus Falintil mengambil langkah lebih lanjut yaitu secara sepihak memasukkan pasukannya “kembali ke barak” di empat lokasi regional terpisah. Tujuan dari kebijakan ini ialah untuk menetralkan upaya Indonesia untuk menggambarkan kekerasan sebagai murni urusan antara orang Timor dan untuk tidak memberikan TNI alasan.

* Pada 1987 Falintil dipisah dari Fretilin. Sebagai Panglima Falintil, Xanana Gusmão, keluar dari Fretilin. Pada tahun berikutnya dia menjadi Presiden Conselho Nacional da Resistencia Maubere, CNRM (Dewan Nasional Resistansi Maubere), yang merupakan lembaga penerus Conselho Revolucionaria da Resistencia Nacional (Dewan Revolusi Resistansi Nasional) yang mempunyai basis lebih luas dan sebagai cikal bakal Conselho Nacional da Resistencia Timorensis, CNRT (Dewan Nasional Resistansi Timor) yang dibentuk pada 1998. Kalau merenungkan peran utama front bersenjata resistansi, yang diwakili oleh Falintil, dari awal dekade 1980-an kebanyakan pelanggaran yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding pada tahun-tahun awal Resistansi, dilakukan oleh Falintil. Lihat Bagian 4: Resistansi: Struktur dan Strategi.

Tabel 14 - Tanggung jawab Fretilin/Falintil atas pembunuhan tidak sah dan penghilangan paksa (kasus yang dilaporkan kepada CAVR)

| | | |
|------------------|-------|------------|
| 1975 | 49,0% | (561/1145) |
| 1976-1984 | 16,6% | (563/3398) |
| 1985-1998 | 3,7% | (18/488) |
| 1999 | 0,6% | (5/898) |

Pelanggaran yang dilakukan pada 1975

Penahanan dan penyiksaan

Reaksi Fretilin atas gerakan bersenjata UDT termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap ratusan pemimpin dan pendukung. Fretilin menahan kebanyakan pendukung UDT pada minggu-minggu pertama pemberontakan umum bersenjata, 20-27 Agustus 1975. Karena terdesak oleh gerak maju pasukan Fretilin, banyak pemimpin dan anggota UDT melarikan diri dari wilayah ini ke Timor Barat. Pemimpin partai politik Apodeti, KOTA, dan Tralabista juga ditahan. Kadang anggota keluarga korban juga ditahan.

Anggota dan pendukung Fretilin dan pasukan Fretilin memberikan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat dalam skala luas terhadap para tahanan yang mereka tahan selama konflik bersenjata internal. Tindakan ini terjadi di setiap distrik di Timor-Leste kecuali Oecussi tetapi terkonsentrasi di Distrik Ermera, Dili, Manufahi, Bobonaro, Liquiçá, Manatuto, dan Baucau.

Banyak mantan tahanan Fretilin melaporkan bahwa mereka dipukuli dengan kejam dan disiksa. Anggota Fretilin juga aktif melibatkan penduduk sipil untuk menghukum anggota UDT. Banyak tahanan meninggal atau dibunuh di tahanan. Setelah invasi Indonesia, Fretilin tetap menahan sampai ribuan orang, tanpa memberi makanan dan air, tetapi menyuruh mereka melakukan kerja paksa seperti membawa barang berat dan menanam di ladang. Beberapa tahanan meninggal karena kondisi ini dan beberapa dieksekusi.

Bukti yang diberikan kepada Komisi termasuk laporan mengenai cara-cara penyiksaan berikut yang dilakukan oleh anggota Fretilin selama periode ini

- Memukul berulang-ulang baik dengan tangan maupun alat termasuk senjata, pipa besi, kayu, bambu, rotan, kabel rem, helm, alu, paku, dan cambuk bergerigi. Beberapa tahanan dipukuli sampai mati atau pingsan, buta, atau tuli
- Tahanan disuruh saling memukul, termasuk tahanan yang masih mempunyai hubungan keluarga
- Menusuk

- Mencambuk
- Mengikat tahanan sebelum dipukuli sehingga mereka tidak bisa membela diri
- Menyeret tahanan di tanah sampai mereka terluka dan berdarah
- Menelanjangi tahanan dan memaksa mereka tidur di tanah yang keras

Setelah invasi Indonesia, kebanyakan tahanan Fretilin terkonsentrasi di Aileu. Untuk mencegah mereka bergabung dengan Indonesia atau memberi mereka informasi, para tahanan ini yang tidak dieksekusi di Aileu (lihat pada segmen “Eksekusi sewenang-wenang” di bawah) dipindah secara massal ke arah barat, melewati Maubisse, di mana sampai di Fleicha (Same, Manufahi) sebagian dibawa ke Ainaro dan sebagian besar ke Kota Same (Manufahi). Tahanan yang dibawa ke Ainaro dilepas ketika mereka sampai di sana. Saat pasukan Indonesia juga bergerak maju sepanjang rute selatan dan dari pantai selatan, pemimpin dan pendukung Fretilin setempat serta orang-orang yang menyekap para tahanan merasa marah terhadap mereka yang dicurigai bekerjasama dengan orang-orang yang melakukan invasi, dan para tahanan ini menjadi korban kekerasan lebih lanjut.

Eksekusi sewenang-wenang

Komisi berkesimpulan bahwa sebelum gerakan bersenjata UDT pada 11 Agustus 1975 anggota partai Fretilin dan UDT terlibat dalam sejumlah konfrontasi yang melibatkan kekerasan di distrik Dili, Ainaro, dan Ermera. Setelah gerakan bersenjata UDT, pemberontakan bersenjata Fretilin melibatkan tidak hanya penahanan pendukung UDT tetapi juga eksekusi orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan UDT, dan sejumlah kecil orang yang mempunyai hubungan dengan Apodeti.

Kebanyakan pembunuhan terjadi di Liquiçá, Aileu, Ermera, Dili, dan Manufahi. Sebagian besar pembunuhan ini dilakukan khususnya terhadap orang-orang yang diidentifikasi sebagai pemimpin UDT dan orang-orang yang terlibat tindak kekerasan selama gerakan bersenjata. Namun demikian ada juga pembunuhan acak dan kasus-kasus eksekusi tahanan secara massal, seperti di Aileu dan Manufahi. Lebih daripada seratus tahanan dieksekusi oleh pasukan Fretilin di Aileu, antara Desember 1975 dan Januari 1976.

Bukti yang diberikan kepada Komisi termasuk laporan mengenai cara-cara berikut yang digunakan anggota Fretilin untuk mengeksekusi penduduk sipil dan petempur yang tertangkap:

- Pemenggalan kepala
- Menyuruh tahanan berjajar dan mengeksekusi mereka dengan menembak
- Mengikat tahanan di tiang bendera dan mengeksekusi mereka dengan menembak
- Memukul penduduk sipil dan tahanan kemudian mengeksekusi mereka
- Menembak secara membabibuta ke arah sekelompok penduduk sipil di masyarakat yang dicurigai sebagai musuh politik

- Tidak merawat luka orang-orang yang tertawan, yang mengakibatkan kematian
- Eksekusi tahanan dan penduduk sipil dengan memakai senjata tradisional, seperti parang, tombak, dan pisau
- Eksekusi massal tahanan dengan melempar granat ke arah sekelompok orang yang bukan petempur
- Mengikat korban ke pohon kemudian memukulnya sampai mati

Korban dan saksi melaporkan bahwa insiden berikut yang melibatkan pelanggaran berat terhadap tahanan oleh orang-orang yang diidentifikasi mempunyai hubungan dengan Fretilin terjadi antara Agustus 1975 dan Februari 1976 di Distrik Aileu, Ainaro, Ermera, Liquiçá, Manatuto, dan Manufahi. *

- Pada 7 Agustus 1975 pasukan Fretilin menyerang dusun Maleria, Lumluli, dan Usululi di Desa Maulau (Maubisse, Ainaro), dan membunuh puluhan penduduk sipil serta menghancurkan harta benda dan ternak.
- Pada 20 Agustus 1975 Fretilin menangkap delapan orang di Fatisi (Laulara, Aileu) karena dicurigai sebagai mata-mata UDT; semua orang ini kemudian dibunuh oleh pasukan Fretilin.
- Pada 20 Agustus 1975 anggota Fretilin menangkap dan menahan 40 anggota UDT di Asumanu (Liquiçá, Liquiçá). Delapan orang dari kelompok ini kemudian dibunuh oleh Fretilin di Dusun Hatumatilo.
- Pada 20 Agustus 1975 Fretilin menculik tujuh anggota UDT di Kaitugloa (Liquiçá), orang-orang ini dibawa ke Darulete (Liquiçá, Liquiçá) dan dieksekusi.
- Pada 22 Agustus 1975 pasukan Fretilin masuk ke Desa Paramin (Atsabe, Ermera) dan membunuh 11 orang karena dicurigai sebagai pendukung Apodeti.
- Pada 22 Agustus 1975 seorang anggota Fretilin menembak dan melukai seorang pendukung UDT di Maubisse (Ainaro). Keluarga korban yakin dia kemudian dibunuh di Aissirimou (Aileu) pada 26 Agustus 1975.
- Pada 27 Agustus 1975 pasukan Fretilin menahan dan mengeksekusi seorang pemimpin Apodeti, Celestino da Silva, di Same (Manufahi).
- Pada 30 Agustus pasukan Fretilin membunuh seorang anggota UDT di Tokoluli (Railaco, Ermera).
- Suatu hari di Agustus 1975 pasukan Fretilin, bersenjata panah dan tombak, menangkap delapan orang di Desa Seloi-malere (Aileu, Aileu). Korban diikat dan diseret di sepanjang jalan, satu orang dipukul sampai babak belur dalam serangan ini.
- Pada atau sekitar 3 September 1975 pasukan Fretilin membunuh empat orang di Distrik Aileu.

* Perincian lebih lanjut mengenai setiap pembunuhan ini ada di Segmen 7.2.3, bab 7.2.: Pembunuhan tidak sah dan Penghilangan Paksa

- Pada 4 September pasukan Fretilin menyerang Desa Hatuconan (Laclo, Manatuto) dan menangkap 12 anggota UDT. Pasukan Fretilin kemudian mengeksekusi sembilan orang ini di tempat yang dikenal sebagai Makati.
- Pada 7 September pasukan Fretilin menembak dan memenggal kepala satu orang lain di Laclo.
- Pada 15 September pasukan Fretilin memasuki Desa Katrai Kraik (Letefoho, Ermera) dan mengeksekusi tujuh orang pendukung UDT.
- Pada 25 September dua anggota Fretilin menembak seorang komandan UDT di Ermera. Korban sebelumnya diajukan ke Komisi Interogasi Fretilin di Ermera pada hari itu juga.
- Suatu hari pada September 1975 pasukan Fretilin mengeksekusi satu orang di Railaco (Ermera) yang termasuk dalam kelompok 50 orang pendukung UDT yang menyerah ke pasukan Fretilin.
- Pada Desember 1975 pasukan Fretilin membunuh 10 tahanan di penjara Fretilin di Aissirimou, Aileu, termasuk mantan kepala polisi Portugis, Letnan Kolonel Rui Gouveia Maggiolo. Pasukan Fretilin, bersenjata G-3, menyuruh tahanan berjajar dan menembak mereka.
- Pada Desember 1975 pasukan Fretilin mengeksekusi sampai 160 tahanan di Manifuni-Hun, Aissirimou (Aileu).
- Pada Desember 1975 pasukan Fretilin menembak sampai 26 tahanan di Aissirimou (Aileu).
- Pada 28 Desember 1975 pasukan Fretilin mengeksekusi enam tahanan di Maubisse, Ainaro.
- Pada atau sekitar 27 Januari 1976, pasukan Fretilin mengambil delapan orang dari tahanan di Hola Rua (Same, Manufahi), termasuk Sekretaris Jenderal Apodeti, José Fernando Osório Soares, dan mengeksekusi tujuh orang di sebuah tempat di dekat penjara yang dikenal sebagai Hat Nipah.
- Pada 29 Januari 1976, pasukan Fretilin memindahkan 34 tahanan dari Hola Rua ke sebuah gedung SD di Same di mana mereka ditahan bersama sepuluh orang lain. Sembilan tahanan berhasil lolos saat dibawa dari sekolah ke “audiensi publik”, walaupun dua orang lain terbunuh. Sebagai balas dendam atas larinya tahanan ini, pasukan Fretilin menembak ke arah tahanan yang masih ditahan di gedung sekolah. Sekitar 30 orang meninggal dalam insiden ini dan empat selamat.

1976-1999

Penahanan dan penyiksaan

Setelah invasi Indonesia Fretilin tetap menahan orang di wilayah *zona libertadas* (zona bebas) yang dikuasai Fretilin. Komite Sentral Fretilin secara rutin menggunakan penahanan untuk menegakkan disiplin dan menghukum orang-orang yang diketahui atau dicurigai sebagai lawan politik atau berhubungan dengan pasukan pendudukan. Pada kenyataannya tindakan apapun baik politik atau bukan, atau tindakan yang mencurigakan yang tidak disetujui oleh pemimpin atau pejabat Fretilin, bisa dianggap melanggar aturan Fretilin.

Tahanan disekap di bangunan primitif seperti bangunan mirip kandang babi atau kandang ayam, gubuk dari bambu, serta lubang di tanah. Pada awalnya bangunan ini hanya merupakan tempat orang ditahan, tetapi pada 1977 banyak pusat penahanan diubah menjadi kamp rehabilitasi nasional, yang dikenal sebagai *Renal*.

Renal biasanya didirikan untuk tujuan “pendidikan” politik. Di beberapa *Renal* tahanan memang menerima “pendidikan” politik dan latihan membaca serta diwajibkan bekerja di ladang komunal. Di *Renal* lain, bagaimanapun juga, aturannya sangat ketat: tahanan memberitahu Komisi tentang kerja paksa, ransum makanan yang sedikit, dan pemukulan yang sering terjadi. Banyak tahanan meninggal karena kondisi ini.

Hukuman penjara secara teoretis tidak terbatas (sampai tahanan dianggap sudah direhabilitasi) dan periode tahanan kadang berlangsung sampai pasukan Indonesia menangkan atau memaksa ditinggalkannya basis tempat *Renal* berada.

Bukti yang dipertimbangkan Komisi termasuk kesaksian mengenai cara-cara penyiksaan dan penganiayaan berikut yang dialami oleh korban:

- Pemukulan bertubi-tubi dengan tangan, senjata, cabang berduri, atau kayu lain
- Membakar tubuh korban dengan pipa panas atau kayu menyala
- Mencambuk
- Mengikat korban ke pohon dan meninggalkan korban di terik matahari sampai lama
- Mengikat korban sedemikian rupa sampai gerakannya terbatas dan mereka tidak bisa makan sendiri atau pergi ke WC
- Mengencingi korban
- Memasukkan korban ke lubang yang penuh semut
- Menendang dengan sepatu bot tentara yang berat

Tahanan dihadapkan pada praktik keadilan yang berlapis (*critica-autocritica, justo correctivo, dan justiça popular* – lihat Bagian 5: Resistansi: Struktur dan Strategi) dengan prosedur yang berbeda tergantung berat tidaknya pelanggaran.

Mereka yang dituduh melakukan pelanggaran paling berat, seperti pengkhianatan, harus dihadapkan ke “*justiça popular*”, di mana tidak ada perlindungan dasar seperti keadilan prosedural. Terduduh tidak diberi tahu sifat tuduhannya sebelum “pengadilan” dilaksanakan, tidak dianggap tak bersalah, dan tidak memiliki hak jawab atas tuduhan yang dibuat. Banyak tertuduh ditahan selama berbulan-bulan sebelum diajukan ke “pengadilan”. Orang-orang yang menghadiri “pengadilan” diminta membuat keputusan hukum. Tidak ada banding terhadap keputusan vonis atau hukuman. Hukuman diputuskan oleh perwira senior Falintil atau Fretilin, sering orang yang sama yang melakukan penangkapan, dan sering sangat berat dan tidak sesuai dengan kejahatan yang dituduhkan, pada umumnya termasuk hukuman mati dengan eksekusi.

Eksekusi sewenang-wenang

Komisi mendengar banyak kesaksian tentang pembunuhan orang yang bukan petempur yang dilakukan Fretilin dan Falintil pada periode Februari 1976-79. Selama periode ini pemimpin dan anggota kedua lembaga ini terlibat pelanggaran berat di sebagian besar distrik di wilayah ini. Pemimpin senior Fretilin dan komandan Falintil memerintahkan banyak pembunuhan yang dilaporkan ke Komisi, dan dalam beberapa kasus melakukannya sendiri. Meskipun beberapa orang yang terbunuh adalah orang-orang sipil yang memiliki hubungan dengan UDT dan Apodeti, yang bekerjasama dengan Indonesia, kebanyakan orang yang terbunuh, dilenyapkan, atau meninggal akibat kekurangan makan atau penganiayaan lain selama periode ini adalah anggota Fretilin atau Falintil atau penduduk sipil yang tinggal di basis-basis Fretilin.

Antara 1980 dan 1999 skala pembunuhan Falintil yang dilaporkan jauh lebih sedikit dibanding 1976-79. Lebih jauh, pola pembunuhan sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Korban adalah orang-orang yang bukan anggota Resistansi tetapi mereka yang bekerja dengan Indonesia (kadang bukan keinginan mereka) dan korban sampingan serangan Falintil.

Komisi mendengar tentang sejumlah pembunuhan oleh Fretilin pada 1976-79 terhadap orang-orang yang mempunyai kaitan dengan partai lain, kebanyakan korban diidentifikasi oleh Komisi sebagai orang yang memiliki kaitan dengan UDT. Pembunuhan cenderung terjadi di daerah-daerah, seperti di distrik Ermera dan Manatuto, di mana dukungan terhadap UDT dan Fretilin kuat dan tingkat kekerasan selama “perang sipil” tinggi.

Dalam beberapa kasus anggota UDT dibunuh oleh anggota biasa Fretilin karena balas dendam. Dalam kasus lain, seperti pembunuhan paling tidak sembilan orang di Venilale (Baucau) antara 1 dan 12 Februari 1976, ada bukti keterlibatan orang-orang yang berkedudukan tinggi. Komisi juga menerima laporan tentang pembunuhan mantan anggota UDT yang dituduh menjadi mata-mata Indonesia dan orang yang dieksekusi karena ditengarai melakukan hubungan dengan keluarga mereka yang orang UDT yang berada di daerah yang dikuasai Indonesia.

Pada 1976-77 sekitar 60 orang dieksekusi atau meninggal di tahanan, akibat konflik internal di Resistansi. Mereka termasuk:

- Aquiles Freitas, komandan dari Komando Bero-Quero di Quelicai (Baucau), dan sejumlah pembantu utamanya, termasuk Ponciano dos Santos, Antonio Freitas, dan Joao Teodoso de Lima dieksekusi di Lobito (Vemasse, Baucau) dan di Baguia (Baguia, Baucau) pada Desember 1976 – Januari 1977
- Francisco Ruas Hornay dan paling tidak 14 pengikutnya, yang dieksekusi di Iliomar (Lautém) pada November 1976
- Mantan Wakil Kepala Staf Falintil, José da Silva, dan kemungkinan 40 pengikutnya, yang dieksekusi atau meninggal dalam tahanan antara Oktober 1976 dan Agustus 1977 setelah ditangkap di Distrik Ermera pada Oktober 1976.

Selama konflik internal Fretilin yang pecah pada 1977 ratusan pengikut dan orang-orang yang dicurigai sebagai pengikut Presiden Fretilin, Francisco Xavier do Amaral, dieksekusi atau meninggal akibat siksaan dan penganiayaan dalam tahanan. Pembersihan terkonsentrasi di Aileu, dan Manufahi di Sektor Utara Tengah dan Selatan Tengah, dan lebih sedikit di Quelicai di Distrik Baucau dan Uato Carbau dan Uatolari Distrik Viqueque di Sektor Timur Tengah dan Covalima dan Ermera di Sektor Perbatasan Selatan dan Perbatasan Utara. Mereka yang diincar termasuk anggota Komite Sentral, komandan militer senior, dan kader Fretilin tingkat menengah dan organisasi binaannya serta anggota biasa Fretilin, pasukan Falintil, dan penduduk sipil yang tinggal di basis Fretilin.

Banyak korban pembersihan ini meninggal dengan cara mengenaskan, termasuk:

- Dalam eksekusi massal terbuka yang sangat brutal
- Akibat terlantar di pusat penahanan dan *Renal* di mana makanan, papan, sanitasi, dan perawatan kesehatan yang diberikan kepada tahanan sangat tidak memadai, dan ini tampaknya merupakan bagian tidak terpisahkan dari aturan penjara
- Akibat siksaan yang kejam di tahanan yang meliputi cara-cara seperti membakar dengan pipa panas, pemukulan berulang-ulang, menggantung korban di pohon, dan memotong tubuh korban.

Komisi berkesimpulan bahwa pemimpin senior Fretilin tidak hanya tahu dan menyetujui praktik-praktik ini, yang biasanya terjadi di atau dekat tempat di mana Komite Sentral Fretilin dan administrasi Sektor dan Zona bermarkas, tetapi dalam banyak kasus mereka juga menjadi pelaku.

Selain pembunuhan dan kematian yang berkaitan dengan konflik politik di dalam tubuh Fretilin ada situasi lain di mana Fretilin/Falintil melakukan pelanggaran ini. Di antara kategori korban yang telah dieksekusi atau yang meninggal akibat ditelantarkan atau penganiayaan lain di tahanan yang dilaporkan kepada Komisi adalah:

- Penduduk sipil yang dicurigai merencanakan untuk menyerah, sedang menyerah, atau yang telah menyerah
- Pemimpin atau anggota Fretilin atau Falintil setempat yang mendorong penduduk sipil untuk menyerah
- Orang-orang yang memisahkan diri dari tempat-tempat konsentrasi utama penduduk ditangkap dan sebagian atau semuanya dieksekusi
- Tahanan yang dibunuh saat pasukan Indonesia masuk ke daerah tempat mereka ditahan
- Penduduk desa yang dicurigai atau yang memang pendukung partai “prointegrasi” yang dibunuh saat pasukan Indonesia masuk ke suatu daerah
- Orang-orang yang mempunyai pandangan berbeda
- Orang-orang yang setelah menyerah disuruh ABRI, Hansip, atau anggota pemerintahan sipil untuk kembali ke hutan untuk meyakinkan orang-orang yang masih bertahan di hutan untuk menyerah
- Orang-orang yang bergabung kembali dengan Resistansi setelah sebelumnya menyerah atau tertangkap pasukan Indonesia
- Keluarga kolaborator serta kolaborator itu sendiri
- Orang-orang yang disalahkan atas kegagalan serangan Fretilin terhadap basis-basis pasukan Indonesia dan atas serangan-serangan Indonesia yang berhasil menghancurkan basis Fretilin dan Falintil
- Orang-orang yang tinggal di basis Fretilin yang berhubungan dengan orang-orang yang berada di daerah yang dikuasai Indonesia
- Orang-orang yang tinggal di basis Resistansi, di bawah kontrol Indonesia, atau di daerah yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh kedua pihak, yang didapati sedang mencari makanan atau melakukan kegiatan sehari-hari mereka

Meski mengakui tekanan besar yang diciptakan oleh serangan Indonesia yang membabitnya terhadap basis Fretilin, terutama pada tahun-tahun akhir dari periode ini, Komisi menyatakan bahwa pemimpin Fretilin saat itu bertanggung jawab dalam menciptakan iklim kekerasan dan tidak adanya toleransi ideologi, yang memungkinkan terciptanya kondisi di mana pembunuhan yang sangat beragam ini terjadi. Selain itu Komisi berkesimpulan bahwa pemimpin dan komandan Fretilin/Falintil bertanggung jawab karena memerintahkan atau secara langsung melakukan pembunuhan ini.

1980-1999

Antara 1980 dan 1999 ada penurunan tajam jumlah pembunuhan oleh Falintil. Karena masyarakat Timor mengalami militerisasi yang tinggi selama periode ini, status banyak penduduk sipil yang terbunuh oleh Fretilin/Falintil sering tidak jelas. Ini termasuk orang-orang yang dipaksa berada di tempat berbahaya, baik sebagai Hansip, orang yang direkrut paksa menjadi TBO (Tenaga Bantuan Operasi), atau terlibat dalam berbagai Operasi Kikis, orang yang diwajibkan jaga malam, atau

yang direkrut secara paksa ke dalam kelompok milisi. Komisi percaya bahwa tanggung jawab atas kematian dalam kasus-kasus tersebut harus dipikul terutama oleh mereka yang menempatkan orang-orang ini dalam bahaya, yaitu pasukan keamanan Indonesia. Selain itu banyak korban pembunuhan Falintil adalah Hansip, kepala desa, dan anggota pemerintah sipil lainnya, yang memegang jabatan yang, tidak seperti di wilayah Indonesia lain, telah termiliterisasi di wilayah pendudukan Timor-Leste

Karena garis batas antara petempur dan bukan petempur sering kabur dan karena tidak selalu jelas dari informasi yang ada apakah korban tertentu merupakan sasaran khusus, tidak selalu mungkin bagi Komisi untuk menentukan berdasarkan informasi yang ada apakah pelanggaran telah terjadi, dan jika ya, siapa yang bertanggung jawab.

Pola pembunuhan tidak sah oleh Resistansi yang menurun, yang terutama tampak jelas pada dekade akhir pendudukan Indonesia, bisa dijelaskan dengan beberapa perkembangan terkait. Sebuah kebijakan baru telah diambil, menggeser fokus perjuangan pada protes di kota. Meskipun Falintil tetap hidup dan mampu secara militer, perubahan kebijakan memberi penekanan lebih besar pada protes terbuka di kota-kota dan bukannya taktik yang biasanya disukai Falintil, yaitu menunjukkan bahwa Falintil masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan melalui unjuk kekuatan di perdesaan. Kecenderungan ini dipercepat oleh keputusan Indonesia pada akhir 1988 untuk “membuka” secara terbatas wilayah ini ke dunia luar. Pada saat yang sama, keputusan untuk merumuskan strategi Persatuan Nasional dan membangun basis yang seluas mungkin untuk mendukung resistansi, termasuk merangkul orang Timor yang bekerjasama dengan Indonesia, mungkin juga berperan dalam menurunkan kekerasan pada tahun-tahun ini. Sebagai salah satu bagian dari strategi ini pada 1987 resistansi bersenjata, Falintil, secara resmi dipisah dari Fretilin.

Selama periode 1980-99 Falintil membunuh penduduk sipil dalam situasi berikut:

- Dalam serangan terhadap permukiman yang diawasi militer pada awal dekade 1980-an, yang tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan kepada penduduk di wilayah yang dikuasai Indonesia bahwa Falintil masih hidup
- Selama operasi militer Indonesia di mana orang Timor direkrut, biasanya secara paksa
- Dalam serangan ke desa-desa pada pertengahan dekade 1980-an, yang tampaknya sebagai balasan atas operasi militer besar-besaran Indonesia dan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Falintil masih memiliki kapasitas militer untuk melancarkan serangan; petugas jaga desa dan Hansip terutama sangat rentan untuk dibunuh dalam insiden ini
- Dalam serangan yang dilancarkan pada waktu tertentu, termasuk peringatan ulang tahun (seperti Hari Kemerdekaan Indonesia dan hari berdirinya Falintil) dan selama pemilihan umum, pada saat mereka bisa menarik perhatian dunia internasional dan di Indonesia dan Timor-Leste

Pembunuhan ini terjadi dalam konteks operasi militer dan seperti yang dicatat di atas, Komisi sering mengalami kesulitan dalam menentukan apakah penduduk sipil yang terbunuh dalam situasi tersebut jelas dijadikan sasaran.

Ada kasus-kasus pembunuhan yang direncanakan yang dilaporkan selama periode ini, misalnya, saat Falintil membunuh penduduk sipil yang disuruh ABRI/TNI untuk mencari sendirian keluarga yang masih di hutan, atau saat Falintil membunuh anggota Hansip dan kolaborator lain dan sebelum serta sesudah Jajak Pendapat 1999. Paling tidak dalam beberapa kasus ini Komisi menerima informasi tepercaya bahwa Pemimpin Falintil tidak menyetujui pelanggaran ini.

Pemindahan paksa dan kelaparan

Program pengeboman dan eksekusi penduduk sipil secara besar-besaran oleh pasukan keamanan Indonesia selama dan setelah invasi memaksa ratusan ribu penduduk Timor melarikan diri dari rumah dan desa mereka. Sebagai tanggapannya Fretilin mengumumkan kebijakan mengevakuasi penduduk sipil ke tempat-tempat aman dan menyusun sebuah gerakan pembebasan nasional di gunung.

Di banyak daerah yang dikontrol Fretilin, kondisi hidup pada bulan-bulan setelah pengungsian awal sangat sulit. Masalah mereka agak berkurang setelah struktur dibentuk untuk mendukung kegiatan seperti pertanian komunal dan untuk memenuhi kebutuhan orang yang paling rentan. Namun demikian, bahkan di mana organisasi semacam ini terbentuk tingkat kematian tetap sangat tinggi.

Pada saat kampanye militer Indonesia meningkat, Fretilin dan penduduk di bawah kontrolnya terpaksa bergerak ke wilayah-wilayah yang lebih terpencil. Makanan menjadi semakin sulit dan persoalan apakah penduduk yang bersama Fretilin harus menyerah menjadi persoalan utama. Mereka yang berada dalam situasi ini mempunyai pilihan yang sulit Mereka mendengar bahwa orang-orang yang menyerah kepada pasukan Indonesia dimasukkan ke dalam kamp-kamp, dan sering disiksa atau dibunuh. Mereka tahu, bagaimanapun juga, bahwa apabila mereka tetap tinggal di gunung mereka kemungkinan akan mati kelaparan. Masalah menyerahkan diri tidak bisa dibicarakan secara terbuka, karena takut dihukum oleh pemimpin Fretilin.

Komisi menyadari keputusan sangat sulit yang dihadapi pemimpin Fretilin saat itu. Kelangsungan hidup orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya merupakan tanggung jawab langsung mereka, begitu juga kelangsungan hidup gerakan Resistansi secara keseluruhan. Ada bahaya nyata bahwa orang-orang yang menyerah akan, baik karena diancam maupun secara sukarela, memberitahu tempat mereka yang masih bertahan Apabila hal ini terjadi mereka yang bertahan di hutan dan gunung kemungkinan akan diserang. Pada saat yang sama setiap keluarga juga harus mengambil keputusan hidup-mati. Mereka dihadapkan pada prospek kelaparan dan kematian apabila mereka tidak menyerah, dan masa depan yang tidak pasti yang mungkin berakhir sama, jika mereka menyerah.

Meski persoalan sekitar menyerahkan diri rumit, jelas bahwa telah diambil keputusan yang tidak bisa dimaafkan untuk menyiksa dan memperlakukan secara buruk, dan dalam beberapa kasus membunuh, orang-orang yang mau menyerah. Pemimpin Fretilin pada saat itu tetap bertanggung jawab atas pelanggaran hak korban akibat keputusan mereka, yang tidak bisa dibenarkan apapun alasannya.

1999

Selama periode sebelum Jajak Pendapat pada 1999, Falintil sungguh-sungguh membatasi diri, termasuk dengan memasukkan pasukannya ke barak. Secara umum mereka bertindak secara disiplin meski dihadapkan pada pembunuhan penduduk sipil dalam skala luas oleh pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaannya.

Pelanggaran prinsip hukum internasional oleh Fretilin/Falintil

Komisi menyatakan bahwa partai Fretilin secara kelembagaan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan selama konflik bersenjata internal. Untuk periode 1976-99 Komisi menggunakan istilah Resistansi, yang terdiri atas pejuang bersenjata dan anggota sipil gerakan klandestin yang sebagian anggota Fretilin.*†

Konflik internal bersenjata

Selama periode konflik internal bersenjata perilaku Fretilin melanggar standar yang tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa. Pasal ini melarang jenis-jenis perilaku tertentu yang ditujukan kepada penduduk sipil atau petempur yang meletakkan senjata karena tertangkap, terluka, atau karena sebab lain. Tindakan yang dilarang termasuk:

- Pembunuhan
- Kekerasan terhadap seseorang, termasuk penyiksaan atau penganiayaan
- Perlakuan yang memalukan atau merendahkan atau perlakuan buruk lain yang merendahkan martabat

Komisi berkesimpulan bahwa perilaku Fretilin selama periode konflik internal bersenjata termasuk tindakan terlarang yang dilakukan berulang-ulang. Eksekusi penduduk sipil, serta orang yang dicurigai atau dikenal sebagai pendukung atau anggota UDT, jelas merupakan pelanggaran di mana Fretilin bertanggung jawab menurut hukum internasional.

* Dijelaskan dalam Laporan ini sebagai 'Fretilin/Falintil', karena kesulitan untuk membedakan secara tepat antara anggota partai dan pejuang Falintil.

† Karena hukum hak asasi manusia internasional memberi kewajiban kepada negara dan bukannya organisasi non-negara seperti partai politik dan gerakan pembebasan, Fretilin tidak bisa dimintai pertanggungjawaban menurut hukum internasional atas pelanggaran standar tersebut. Namun demikian, hukum humaniter internasional memberi kewajiban kepada negara dan lembaga non-negara seperti Fretilin.

Meskipun penahanan penduduk sipil dan petempur musuh tidak secara khusus dilarang oleh Pasal Umum 3, penyiksaan, pemukulan, dan perlakuan kejam lainnya terhadap para tahanan melanggar ketentuan tersebut. Komisi berkesimpulan bahwa dalam hal ini Fretilin juga harus mempertanggungjawabkan berbagai pelanggaran hukum humaniter. Selain itu Komisi berkesimpulan bahwa perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan di tempat penahanan oleh Fretilin sering merendahkan atau memalukan, dan ini melanggar prinsip hukum humaniter.

Konflik bersenjata internasional 1976-1999

Selama konflik bersenjata internasional peraturan yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan yang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional mengikat Fretilin/Falintil sebagai pihak yang terlibat dalam konflik internasional. Komisi melihat bahwa perilaku Fretilin/Falintil kadang melanggar peraturan ini, sehingga Fretilin/Falintil bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran ini.

Komisi berkesimpulan bahwa pasukan Fretilin/Falintil melakukan eksekusi, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan serta penganiayaan terhadap penduduk sipil dan menahan penduduk sipil dalam kondisi yang tidak manusiawi. Semua perilaku tersebut dilarang oleh Pasal 27 Konvensi Jenewa Keempat yang menyatakan bahwa penduduk sipil harus diperlakukan dengan manusiawi dan dengan menghargai harkat kemanusiaan dan martabat mereka, dan secara khusus mereka harus dilindungi dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Meskipun Konvensi ini menyatakan bahwa pihak yang terlibat konflik bisa mengambil langkah, dalam kaitannya dengan penduduk sipil, yang perlu untuk keamanan sebagai akibat dari perang, ini tidak termasuk praktik-praktik seperti pembunuhan tidak sah, dan penyiksaan serta penganiayaan. Perilaku semacam ini jelas dilarang oleh Pasal 32 Konvensi Jenewa Keempat, demikian pula tindakan apapun yang menyebabkan penderitaan fisik atau pembinasaan penduduk sipil. Penggunaan penyiksaan fisik atau psikologis untuk menarik informasi dari tahanan sipil jelas dilarang (Pasal 31 Konvensi Jenewa Keempat), dan Komisi berkesimpulan bahwa anggota Fretilin/Falintil dalam beberapa kasus melanggar prinsip ini dalam upaya mengumpulkan informasi intelijen dari orang-orang yang dicurigai maupun yang dikenal sebagai pendukung Indonesia.

Meski Fretilin/Falintil berhak, menurut Pasal 5 Konvensi Jenewa Keempat, untuk menolak memberi perlindungan yang diwajibkan dalam hukum humaniter kepada orang-orang yang melakukan kegiatan yang bermusuhan, Fretilin/Falintil bagaimanapun juga diwajibkan memperlakukan orang-orang ini dengan manusiawi, dan memenuhi hak mereka atas pengadilan yang adil. Karena tidak menjamin bahwa mereka yang dicurigai berkhianat terhadap Fretilin/Falintil bisa mendapatkan pengadilan yang reguler dan adil dan perlakuan yang manusiawi, anggota Fretilin/Falintil melanggar kewajiban ini dalam setiap kasus di mana orang yang dicurigai menjalani pengadilan yang tidak adil, atau dipukuli, disiksa, diperlakukan secara tidak manusiawi, atau dibunuh.

Tanggung jawab pemimpin dan anggota Fretilin/Falintil

Konflik bersenjata antara petempur yang berperang mendukung Fretilin dan UDT cukup hebat sehingga bisa masuk ke dalam definisi 'konflik bersenjata internal' menurut hukum internasional yang mengatur perilaku perang (lihat Bagian 2: Mandat Komisi). Pihak dalam konflik seperti ini diwajibkan mematuhi hukum internasional, khususnya Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa. Tindakan perang yang sah terhadap petempur musuh bukan merupakan pelanggaran kewajiban ini. Namun demikian, pembunuhan, penyiksaan, dan penganiayaan lain terhadap penduduk sipil, tahanan, orang yang sakit dan terluka jelas dilarang.

Komisi berkesimpulan bahwa tindakan anggota Fretilin/Falintil dalam ratusan kasus penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan penduduk sipil, tahanan, orang yang terluka dan sakit melanggar kewajiban mereka menurut Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa.

Komisi menerima sejumlah kesaksian dari para korban dan saksi bahwa anggota Komite Sentral Fretilin terlibat langsung atau menyaksikan penyiksaan dan pembunuhan tahanan selama dan setelah konflik internal bersenjata dan tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikannya.

Bukti yang diperoleh Komisi tidak cukup untuk menentukan bahwa pembunuhan-pembunuhan dan tindakan kejam ini dilakukan untuk mematuhi perintah Komite Sentral Fretilin. Namun demikian, Komite Sentral Fretilin mempunyai wewenang paling tinggi atas anggotanya serta pasukan bersenjata yang ditugaskan atas perintah mereka. Anggota Komite Sentral Fretilin pasti paling tidak mengetahui bahwa tindakan kejam berskala luas terjadi dan tidak mengambil langkah untuk mencegahnya. Mereka juga tidak mengambil langkah untuk mendisiplinkan atau menghukum mereka yang secara langsung bertanggung jawab atas penyiksaan, eksekusi, dan perlakuan kejam lainnya. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka menciptakan kerangka disiplin untuk perlakuan para tahanan ini, bahkan setelah menjadi jelas bahwa pelanggaran keji telah terjadi terhadap tahanan dan penduduk sipil yang tidak bersenjata dan lemah.

Komisi berkesimpulan bahwa beberapa anggota Komite Sentral Fretilin pada Desember 1975 ikut memikul tanggung jawab atas eksekusi terencana dan disengaja di Aileu pada Desember 1975 dan di Same pada Januari 1976 kemungkinan terhadap 200 pendukung UDT dan Apodeti yang ditahan Fretilin. Komisi bisa memastikan bahwa anggota Komite Sentral Fretilin tertentu ikut ambil bagian dalam membuat keputusan untuk mengeksekusi paling tidak beberapa tahanan ini dan kadang melakukan eksekusi sendiri. Komisi diberi tahu bahwa pembunuhan di Aileu dan Same dengan beberapa perkecualian dilakukan menurut prosedur rutin di mana daftar korban dibuat, kuburan disiapkan, dan eksekusi dilaksanakan oleh regu di bawah komando orang-orang tertentu. Komisi menyatakan bahwa penggunaan *modus operandi* yang konsisten seperti ini merupakan bukti bahwa pembunuhan dilakukan secara sistematis. Komisi juga percaya bahwa anggota Komite Sentral Fretilin lain, termasuk beberapa yang paling senior, yang berada di daerah tempat eksekusi berlangsung pasti mengetahui bahwa eksekusi tersebut dilakukan.

Komisi mencermati kasus kejadian antara Agustus 1975 dan Januari 1976 di mana pemimpin Fretilin berhasil melakukan intervensi untuk menghentikan eksekusi massal para tahanan. Ini menunjukkan kepada Komisi bahwa para pemimpin ini, yang termasuk anggota Komite Sentral, seharusnya bisa menghentikan pembunuhan pada kesempatan lain. Tampaknya ini merupakan intervensi komandan tingkat menengah dari daerah lain, yang bergegas ke Same pada akhir Januari 1976 setelah mendengar pembunuhan di sana pada akhir Januari 1976, yang pada akhirnya menghentikan pembunuhan. Ini menunjukkan kepada Komisi bahwa pemimpin senior seharusnya bisa menghentikan pembunuhan lebih awal, jika mereka mau. Perlakuan Fretilin terhadap pendukung UDT dan Apodeti berbeda di setiap distrik. Komandan Fretilin di distrik secara pribadi mengetahui pemimpin UDT dan Apodeti di daerah mereka dan banyak yang bertanggung jawab mengidentifikasi orang-orang yang harus ditahan. Perlakuan yang paling brutal terhadap tahanan terjadi di *Quarter Geral* di Taibessi (Dili) dan di Aissirimou (Aileu). Tahanan yang ditahan di Baucau mengatakan bahwa mereka dipukuli secara teratur tetapi hanya oleh penjaga setelah atasan mereka pergi. Di Distrik Manufahi dan Aileu, pemimpin hadir saat terjadi penyiksaan pemimpin UDT dan Apodeti dan tidak hanya membiarkan tetapi kadang mendorong masyarakat untuk menyerang anggota UDT dan Apodeti.

Jumlah dan sifat pelanggaran yang dilakukan mendorong Komisi untuk menyimpulkan bahwa anggota Komite Sentral Fretilin, komandan senior Falintil dan pemimpin Fretilin di tingkat distrik di Distrik Aileu dan Manufahi terlibat langsung dalam tindakan pelanggaran secara sistematis terhadap penduduk sipil, atau mengetahui bahwa pelanggaran ini dilakukan oleh bawahan mereka, tetapi tidak mengambil langkah efektif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut atau menghukum mereka yang bertanggung jawab. Orang-orang ini karena itu bertanggung jawab, baik langsung atau tidak langsung, atas penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan eksekusi tahanan. Beberapa orang ini termasuk dalam daftar pelaku ganda pelanggaran berat hak asasi manusia yang sudah diserahkan kepada Jaksa Agung dengan rekomendasi untuk diinvestigasi dan kemungkinan diadili, dan kepada kantor Presiden Republik Demokrasi Timor-Leste, dengan rekomendasi agar mereka dilarang memegang jabatan strategis atau senior di kantor pemerintah Timor-Leste.

Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai politik UDT

Komisi mempertimbangkan ratusan wawancara dan pernyataan korban dan saksi yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia atau menyaksikan orang lain menjadi korban oleh anggota UDT. Berdasar bukti ini Komisi berkesimpulan bahwa:

Pada 11 Agustus 1975 para pemimpin partai UDT memerintahkan sebuah gerakan bersenjata yang tujuannya mengambilalih kekuasaan politik di wilayah Timor-Leste. Tidak jelas apakah tujuan ini jelas-jelas dinyatakan pada tahap awal gerakan bersenjata. Namun demikian, hal ini jelas merupakan tuntutan UDT terhadap Pemerintah Timor Portugis beberapa jam setelah melancarkan gerakan ini.

UDT tidak memiliki wewenang sah untuk melancarkan aksi ini, dan dengan melakukan hal tersebut UDT melanggar hak rakyat Timor untuk menentukan masa depan politik, sosial, dan ekonomi mereka. Tindakan partai ini juga melanggar kebebasan dasar untuk memiliki pandangan politik, kebebasan berekspresi, dan kebebasan bergerak.

Selama gerakan bersenjata UDT melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala luas terhadap penduduk sipil, terutama orang-orang yang diketahui atau dipercaya menjadi pemimpin dan pendukung partai politik Fretilin. Ratusan penduduk sipil ditahan secara sewenang-wenang, di mana banyak yang disiksa, dibunuh, dan diperlakukan secara buruk.

Karena konflik bersenjata antara pejuang yang bertempur mendukung Fretilin dan UDT cukup hebat untuk dapat memenuhi definisi 'konflik internal bersenjata' menurut hukum internasional yang mengatur hukum perang, UDT wajib mematuhi hukum internasional seperti juga Fretilin selama konflik ini (lihat segmen tentang Fretilin di atas). Komisi berkesimpulan bahwa penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan penduduk sipil, tahanan, orang yang terluka dan sakit, yang dilakukan oleh pemimpin dan pendukung UDT melanggar Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa serta hukum Portugis yang berlaku.

Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan

Anggota UDT dan pasukan UDT menahan korban di setiap distrik Timor-Leste kecuali Oecussi pada 1975. Dari kasus-kasus penahanan yang dilakukan UDT yang dilaporkan ke Komisi, 25,6% (243/950) terjadi di Distrik Ermera; 23,0% (218/950) di Distrik Dili; dan 16,3% (155/950) di Distrik Bobonaro.

Dari penahanan ini, 20,1% (191/950), dilaporkan terjadi pada hari pertama gerakan bersenjata UDT, 11 Agustus 1975, dan 20,5% (195/950) terjadi dalam sepuluh hari setelahnya.

Pemimpin UDT tidak mampu merencanakan aksi mereka secara memadai dan menahan para tahanan dalam kondisi yang mengesankan, tanpa makanan atau air. Beberapa tahanan meninggal sebagai akibat langsung dari kondisi yang mereka alami. Kasus penganiayaan yang dilaporkan yang dilakukan oleh UDT jelas terkonsentrasi di Distrik Dili (36,7% [95/259]), Distrik Ermera (20,9% [54/259]) dan Distrik Bobonaro (25,9% [67/259]).

Korban penahanan sewenang-wenang oleh UDT yang dilaporkan kepada Komisi sebagian besar adalah laki-laki, dalam usia yang sesuai untuk menjadi anggota militer, dan dipercaya oleh pelaku memiliki hubungan dengan Fretilin. Kadang keluarga korban, termasuk istri, orangtua, dan anak-anak, ditahan secara sewenang-wenang. Secara umum tahanan tidak diperlakukan buruk dengan tujuan menarik informasi, melainkan sebagai suatu bentuk hukuman dalam iklim di mana kekerasan menjadi norma.

Kebanyakan korban yang ditahan UDT disekap di gedung-gedung dekat tempat penangkapan termasuk gudang, sekolah, rumah pribadi, bekas penjara Portugis, barak militer, dan kandang yang menyerupai kandang ayam. UDT juga mendirikan pusat penahanan utama di markasnya di Palapaço, Dili dan di penggilingan (*descascadeira*) dan di *pousada* di Baucau, di mana disekap orang lokal yang ditangkap serta tahanan yang ditangkap dari distrik lain.

Periode penahanan pendek karena gerakan bersenjata berlangsung singkat. Kebanyakan tahanan dilepaskan setelah dua minggu tetapi beberapa ditahan lebih daripada satu bulan. Pada saat dalam tahanan, para tahanan secara reguler dipaksa melakukan kerja seperti memasak untuk tahanan lain dan membersihkan pusat penahanan, membangun jalan, atau membawa batu serta kayu. UDT melepas beberapa tahanan atas keinginan sendiri tetapi kebanyakan ditelantarkan saat pasukan Fretilin menyerang suatu daerah tempat tahanan disekap dan pasukan UDT melarikan diri.

UDT tidak mempersiapkan atau mempersiapkan dengan kurang memadai persediaan makanan untuk orang-orang yang ditahan. Tahanan dari pusat penahanan utama UDT melaporkan bahwa mereka tidak diberi makan; beberapa tidak mendapat makanan sampai sembilan hari. Paling tidak dua orang meninggal karena kondisi penahanan. Beratnya kondisi ini merupakan bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan.

Saksi melaporkan bahwa anggota dan pendukung UDT melakukan tindakan penyiksaan dan penganiayaan berikut terhadap orang-orang yang ditahan secara tidak sah:

- Pemukulan bertubi-tubi dengan tangan atau senjata, oleh satu pelaku atau kadang sekelompok pelaku
- Mencambuk
- Diikat dalam jangka waktu yang lama, kadang sampai lebih daripada satu minggu
- Menyayat korban dengan parang atau pisau cukur
- Menampar dan menendang
- Satu korban melaporkan bahwa dia disundut dengan rokok menyala

Pembunuhan di luar hukum

Anggota dan pendukung UDT melakukan pembunuhan dalam skala luas antara Agustus dan awal September 1975, yang sasarannya adalah orang-orang yang dikenal atau dicurigai sebagai anggota Fretilin di Liquiçá, Dili, Ermera, Manatuto, Manufahi, Bobonaro, dan distrik lain.

Pembunuhan oleh UDT terhadap orang-orang yang diidentifikasi mempunyai hubungan dengan Fretilin terjadi dalam berbagai kesempatan. Segera setelah gerakan bersenjata dilaksanakan, pendukung Fretilin ditangkap, dibunuh, dan sering

dipenggal kepalanya di Manufahi, Liquiçá, dan Ermera, kadang oleh sekelompok orang UDT yang bertindak atas perintah pemimpin mereka. Penjaga penjara membunuh tahanan dalam pusat penahanan UDT, kadang, seperti di Palapaço (Dili), atas inisiatif sendiri dan kadang, seperti di Aifu, Ermera, atas perintah pemimpin partai. Pada akhir Agustus dan awal September 1975, orang-orang yang sudah ditahan beberapa hari setelah UDT melancarkan gerakan bersenjata dieksekusi di Manufahi dan Ermera, saat pasukan Fretilin masuk ke wilayah-wilayah ini. Korban pembunuhan tidak sah oleh UDT ini kebanyakan laki-laki usia militer yang mempunyai hubungan atau dicurigai memiliki hubungan dengan Fretilin.

Cara pembunuhan di luar hukum termasuk:

- Kelompok bersenjata anggota UDT menembak penduduk sipil tidak bersenjata dalam kelompok
- Eksekusi penduduk sipil dengan menggunakan senjata tradisional, seperti parang, tombak, dan pisau
- Melakukan upacara ritual sebelum dan sesudah membunuh
- Memenggal kepala, dan memamerkan kepala yang dipenggal sebagai trofi
- Memotong bagian tubuh, seperti tangan, dan mengeluarkan usus
- Memajang mayat di depan rumah anggota Fretilin
- Membuang mayat atau orang yang luka parah di jurang atau sungai
- Eksekusi tahanan di pusat penahanan dan di tempat terpencil di desa, termasuk perkebunan kopi. Beberapa tahanan diikat tangannya dengan kabel pada saat dieksekusi. Tahanan lain dibawa keluar dari pusat penahanan dalam kelompok kecil kemudian dieksekusi
- Memukul sebelum melakukan eksekusi
- Penghilangan

Insiden pelanggaran berat

Insiden yang dilaporkan ke Komisi di mana pelaku diidentifikasi sebagai anggota atau wakil partai UDT termasuk berikut ini:^{*}

- Selama Agustus 1975 pasukan UDT menahan paling tidak 70 orang di Penjara Ermera: tahanan dipukuli dan tidak diberi makan saat ditahan. Puluhan korban juga disiksa saat ditahan di pusat penahanan yang lebih kecil, di seluruh wilayah Ermera.
- Komisi menerima sejumlah laporan yang menunjukkan bahwa tahanan mengalami penyiksaan dan penganiayaan dalam tahanan di *pousada* dan di *descacadeira* di Baucau pada Agustus 1975 saat tempat-tempat ini dipakai sebagai pusat penahanan

^{*} Untuk perincian lebih lanjut, lihat bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, Bab 7.4.: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan; dan Bab 7.8.: Hak Anak.

- Selama Agustus 1975 anggota UDT dari Turiscai (Manufahi) membunuh enam anggota sebuah keluarga yang ditengarai sebagai pendukung Fretilin, termasuk tiga anak berusia tujuh, enam, dan lima tahun
- Pada 11 Agustus 1975 pasukan UDT membunuh satu orang laki-laki pendukung Fretilin di Lete Foho (Same, Manufahi)
- Antara 11 dan 13 Agustus 1975 anggota UDT membunuh paling tidak 13 orang di Subdistrik Liquiçá (Liquiçá); dalam insiden terpisah di Desa Asumanu, Darulete, Dato, dan Leotela (semua di Subdistrik Liquiçá) tiga dari korban dipenggal kepalanya. Kepala salah satu korban dipajang di depan rumah seorang pemimpin Fretilin, sedang kepala seorang korban lain dipajang di depan rumah seorang pemimpin UDT.
- Antara 11 dan 15 Agustus 1975 di Ermera anggota UDT membunuh tiga pejabat Fretilin dalam insiden terpisah di Subdistrik Railaco, Ermera, dan Hatulia
- Setelah gerakan bersenjata pada 11 Agustus 1975 anggota UDT menahan sekitar 70 anggota Fretilin di sebuah lumbung padi di Corluli (Maliana, Bobonaro) selama sekitar dua bulan. Tahanan tidak diberi makan dan air selama dalam tahanan, dan sebagai akibatnya dua orang meninggal
- Pada 11 Agustus 1975 sejumlah pemimpin dan anggota UDT menangkap mantan delegasi Fretilin dan menahan dia di Penjara Same (Manufahi). Tahanan ini, bersama sejumlah orang lainnya, dipukuli sampai babak belur dan tidak diizinkan meninggalkan selnya selama dua minggu
- Selama Agustus 1975 (tanggal tidak jelas) anggota UDT menangkap 11 orang laki-laki di Lolotoe (Bobonaro) dan menahan mereka di sebuah ruangan selama tiga hari tanpa makanan dan air.
- Pada 14 Agustus anggota UDT menahan tiga anggota Fretilin dan di rumah seorang pemimpin UDT di Guda (Lolotoe, Bobonaro). Orang ini dipukuli sampai babak belur dan ditahan selama satu minggu.
- Pada 14 Agustus pasukan UDT membunuh satu orang di Aitutu (Same, Manufahi)
- Setelah gerakan bersenjata UDT, 100 – 200 anggota Fretilin ditahan di pusat penahanan Palapaço di mana banyak tahanan mengalami perlakuan kejam. Selama itu tahanan, seorang anggota Komite Sentral Fretilin José Siquera, Domingos Conceição, dan José Espirito Santo ditembak mati oleh penjaga UDT mereka.
- Suatu hari pada Agustus 1975 semua kecuali tiga anggota Fretilin yang menjadi bagian dari 11 orang tim delegasi perdamaian yang dikirim oleh Francisco Xavier do Amaral untuk membicarakan penghentian siklus pembunuhan balas dendam yang melanda daerah Laclubar-Soibada-Turiscai, ditangkap dan dibunuh di Fatumakerek (Soibada, Manatuto) atas perintah pemimpin lokal UDT.
- Pada 20 Agustus 1975 seorang penduduk perempuan Timor diperkosa oleh sekelompok anggota UDT di Kota Maubara (Maubara, Liquiçá).

- Pada 27 Agustus anggota UDT menangkap seorang delegasi Fretilin (*delegado*), Antonio Salsinha, yang melarikan diri dari pusat penahanan UDT di Aifu (Poetete, Ermera). Mereka menendang dan memukuli dia kemudian menembak dia. Dia tidak langsung meninggal, jadi anggota UDT mengubur dia hidup-hidup.
- Pada 27 Agustus, saat pasukan Fretilin mendekati Same, anggota UDT membawa 11 anggota pemuda Fretilin, Unetim, yang ditahan di Alas dan Same sejak 11 Agustus, ke pantai Meti Oan di Wedauberek (Alas, Manufahi) dan menembak mati mereka.
- Pada 28 Agustus empat anggota UDT menangkap sejumlah delegasi (*delegados*) Fretilin dan 14 orang lain dari Desa Guda (Lolotoe, Bobonaro). Orang-orang ini dibawa ke Maliana (Bobonaro) dan kemudian ditendang sampai babak belur oleh anggota UDT.
- Pada 1 September 1975, saat pasukan Fretilin hampir masuk ke Subdistrik Ermera dari Leorema (Bazartete, Liquiçá) dan Subdistrik Hatulia (Ermera), pasukan UDT membunuh paling tidak 30 tahanan di desa Klaek Reman (Ermera, Ermera), Aifu (Poetete, Ermera, Ermera)—empat meninggal di Klaek Reman dan paling tidak 26 meninggal di Aifu.

Tanggung jawab dan pertanggungjawaban personel UDT

Pelaku penahanan sewenang-wenang kebanyakan pemimpin UDT di tingkat distrik dan bawahan mereka. Pemimpin ini mengenal penduduk di setiap distrik dan bisa secara efektif mengincar anggota atau pendukung Fretilin. Baik pemimpin distrik maupun bawahan mereka yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Komisi berkesimpulan bahwa pemimpin lokal yang menyebarkan kebencian dan yang memerintahkan korban untuk ditahan, dipukuli, disiksa, atau dibunuh bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan konsekuensi tindakan mereka.

Komisi berkesimpulan bahwa anggota Komite Sentral UDT bertanggung jawab atas konsekuensi yang disebabkan oleh dorongan mereka kepada pengikut mereka melalui siaran radio dan perintah langsung lainnya, untuk “membersihkan komunis”. Saat pemimpin UDT merencanakan gerakan bersenjata, mereka tidak berpikir untuk memastikan agar orang-orang yang mereka perintahkan untuk ditahan diberi makan dan perawatan yang memadai. Mereka juga tidak memerintahkan anggotanya untuk memperlakukan tahanan dengan hati-hati.

Bentuk penganiayaan paling kejam yang dilaporkan kepada Komisi terjadi di markas UDT di Dili, dan di daerah kuat UDT di Ermera dan Liquiçá. Pemimpin UDT dilaporkan hadir saat pembunuhan dan pelanggaran lain terjadi dan dengan sedikit perkecualian mereka memerintahkan pelanggaran ini atau tidak mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran.

Komisi menyatakan bahwa komandan distrik UDT di Distrik Ermera, Manufahi, dan Liquiçá pada Agustus 1975 bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan pelanggaran massal yang berat, termasuk penyiksaan dan eksekusi kelompok-kelompok penduduk sipil tidak bersenjata, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam komando dan wewenang mereka. Beberapa orang ini termasuk dalam daftar pelaku pelanggaran berat ganda hak asasi manusia yang telah diserahkan kepada Jaksa Agung dengan rekomendasi untuk disidik dan diadili, dan ke Kantor Presiden Republik Timor-Leste dengan rekomendasi agar mereka dilarang memegang jabatan strategis atau senior di kantor pemerintah Timor-Leste.

Tindakan anggota Komite Sentral UDT dan pemimpin lain secara langsung menciptakan situasi di mana banyak penduduk sipil secara paksa ditahan tanpa dasar hukum. Para pemimpin tidak bisa menjamin bahwa para tahanan ditahan dalam kondisi yang layak. Mereka sadar bahwa pelanggaran berskala luas dilakukan oleh orang-orang di bawah komando dan wewenang mereka, tetapi jarang mengambil tindakan untuk menghentikan pelanggaran dan tidak ada satu kasus pun yang diselidiki oleh Komisi di mana mereka menghukum pelaku. Komisi menyatakan bahwa pemimpin partai UDT pada saat gerakan bersenjata bertanggung jawab secara moral, politis, dan sejarah atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota UDT selama konflik internal bersenjata, dan atas kekacauan yang muncul. Hal ini, bagaimanapun juga, tidak menghapus tanggung jawab pemimpin dan anggota Fretilin atas pelanggaran yang mereka lakukan terhadap anggota atau pendukung UDT sebagai aksi balas dendam atas penganiayaan mereka.

Pelanggaran prinsip hukum internasional oleh wakil-wakil partai UDT

Komisi berkesimpulan bahwa perilaku UDT selama periode perang saudara dalam banyak hal merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional.*

Selama perang saudara, sebagai pihak yang terlibat dalam konflik internal UDT diwajibkan mematuhi standar yang tertuang dalam Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa. Pasal ini melarang jenis-jenis perilaku tertentu yang dilakukan terhadap penduduk sipil atau petempur yang telah meletakkan senjata karena ditangkap, terluka, atau alasan lain. Tindakan yang dilarang termasuk:

- Pembunuhan
- Kekerasan terhadap seseorang, termasuk penyiksaan atau perlakuan kejam
- Perlakuan yang memalukan atau merendahkan serta perlakuan lain yang merendahkan martabat seseorang.

.....
* Seperti dijelaskan di atas, karena hukum hak asasi manusia internasional memberi kewajiban kepada negara dan bukan lembaga non-negara seperti partai politik, UDT tidak bisa dikatakan mempunyai tanggung jawab hukum atas pelanggaran standar tersebut. Namun demikian, hukum humaniter internasional memberi kewajiban kepada negara dan lembaga non-negara seperti UDT.

Komisi berkesimpulan bahwa dalam melanggar Pasal Umum 3, UDT membunuh, menyiksa, dan menganiaya penduduk sipil dan anggota Fretilin yang tertangkap. Perilaku ini merupakan pelanggaran kewajiban UDT menurut hukum humaniter internasional dan UDT memikul tanggung jawab hukum atas tindakan mereka.

Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai Apodeti

Meskipun Komisi menerima laporan yang jauh lebih sedikit mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota partai Apodeti dibanding Fretilin atau UDT, bukti jelas menunjukkan bahwa di samping berperan langsung dalam tindakan pelanggaran, anggota Apodeti juga memainkan peran dalam invasi Indonesia dan mendukung pendudukan militer dengan berbagai cara.

Komisi berkesimpulan bahwa sejak September 1974 anggota Apodeti berhubungan dengan perwira militer Indonesia. Dari Desember 1974 mereka ikut latihan militer di Atambua, Timor Barat (Indonesia). Latihan ini dilakukan dengan tujuan jelas untuk menyiapkan aksi militer di Timor-Leste, meskipun kemungkinan anggota Apodeti tidak mengetahui secara jelas perincian rencana Indonesia. Kira-kira 200 kader Apodeti terlibat dalam latihan. Saat penguasa kolonial Portugis pergi ke Atambua pada Januari 1975 untuk membujuk anggota Apodeti kembali ke Timor-Leste dan memainkan peran yang konstruktif dalam proses dekolonisasi, mereka menolak dan bahkan meneruskan latihan militer mereka.

Anggota Apodeti bekerja dengan intel militer dan intel sipil di Timor-Leste selama 1974-75, sehingga mementahkan proses dekolonisasi dan menciptakan ketidakstabilan di wilayah ini. Tindakan anggota Apodeti selama periode ini termasuk memberikan informasi kepada militer Indonesia. Sebagian informasi dipergunakan dalam propaganda radio Indonesia yang bertujuan meningkatkan ketidakstabilan dengan membuat hubungan antara Fretilin dan UDT menjadi tegang.

Latihan militer di Atambua merupakan awal partisipasi anggota Apodeti yang dikenal sebagai 'Partisan' dengan personel militer Indonesia dalam operasi terselubung di Timor-Leste dari Agustus 1975, dan operasi berskala lebih besar yang berdampak pada pendudukan kota-kota dan wilayah ini oleh Indonesia sejak Oktober 1975. Selama periode ini anggota Apodeti ikutserta dalam aksi militer Indonesia yang termasuk serangan di Balibó pada 16 Oktober 1975.

Pemimpin Apodeti membantu menyusun dan menandatangani Deklarasi Balibó, yang membantu memberi kesan legitimasi terhadap pendudukan Indonesia yang samasekali tidak sah.

Anggota Apodeti ikutserta dalam invasi skala penuh militer Indonesia di Dili dan Baucau pada Desember 1975, berlayar dengan kapal perang Indonesia dari pelabuhan Indonesia ke Timor-Leste. Mereka kemudian ikut pasukan Indonesia dalam operasi setelah invasi.

Setelah invasi, anggota Apodeti bekerjasama dengan pasukan Indonesia dalam peran pendukung. Namun demikian, mereka membiarkan diri mereka dipakai sebagai alat propaganda bersama anggota partai UDT dan partai lain, sebagai pasukan militer Timor yang menderita akibat berperang dengan Fretilin. Karena itu, mereka sesuai untuk program pemberian informasi yang keliru yang dibuat militer dan pemerintah Indonesia. Informasi tersebut menggambarkan konflik sebagai urusan antara orang Timor, meskipun pada kenyataannya merupakan akibat dari invasi militer Indonesia yang dilakukan tanpa provokasi. Komisi juga menerima bukti bahwa beberapa anggota partai Apodeti juga membantu intel Indonesia menyusun daftar nama para pemimpin, anggota dan simpatisan Fretilin, dan mengidentifikasi setiap anggota partai Fretilin kepada pasukan invasi Indonesia. Akibat dari tindakan ini orang-orang ditahan, disiksa, dan dalam beberapa kasus dieksekusi.

Selama pendudukan militer anggota Apodeti bekerja dengan aparat keamanan Indonesia dan pemerintahan sipil dan tetap melakukan kerjasama meskipun jelas bahwa pasukan militer Indonesia tidak bermaksud mengizinkan rakyat Timor menentukan masa depan politik dan ekonomi mereka sendiri. Dengan mendukung hak militer Indonesia untuk menduduki dan memerintah Timor-Leste, mereka ikut memikul tanggung jawab karena mengabaikan hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri.

Anggota pasukan 'Partisan' yang kebanyakan adalah anggota dan simpatisan Apodeti, terus ikut serta dalam operasi militer Indonesia jauh setelah invasi 1975. Mereka direkrut oleh anggota TNI, polisi, dan Hansip, dan kemudian sebagai anggota milisi. Selain itu beberapa orang menjadi informan dan memberikan informasi kepada personel militer Indonesia. Dalam berbagai peran ini anggota dan mantan anggota Apodeti melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap pendukung prokemerdekaan sepanjang seluruh periode konflik.

Secara singkat, wakil partai Apodeti bertanggung jawab karena ikut berperan dalam pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah invasi militer ke Timor-Leste. Mereka melakukan ini dengan berlatih dan ikutserta dalam operasi militer dengan ABRI, dan kemudian bekerja dengan berbagai kantor rezim pendudukan Indonesia, di mana mereka mempunyai peran langsung dalam banyak pelanggaran berat, serta mendukung pelanggaran massal oleh pasukan keamanan Indonesia.

Tanggung jawab dan pertanggungjawaban partai Trabalhista dan KOTA

Meskipun anggota partai Trabalhista dan KOTA tidak disebut sebagai pelaku langsung banyak pelanggaran, mereka memainkan peran dalam mendukung invasi dan pendudukan Indonesia, dan juga bertanggung jawab karena memainkan peran dalam menciptakan polarisasi dalam masyarakat Timor.

Anggota Tralabhistha dan KOTA ikut berperan dalam menyusun dan menandatangani Deklarasi Balibó yang memberi kesan legitimasi kepada pendudukan Indonesia yang samasekali tidak sah. Dengan demikian anggota partai-partai ini juga mendukung kebohongan bahwa rakyat Timor ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia dalam berurusan dengan PBB. Beberapa anggota partai ini mendukung pemerintah Indonesia dan menjadi anggota pasukan keamanan dan kelompok binaan, termasuk Hansip dan milisi. Dalam peran ini mereka terlibat pelanggaran berat hak asasi manusia.

Meskipun partai Tralabhistha dan KOTA berukuran lebih kecil dan peran mereka dalam konflik tidak sepenting partai-partai lain, anggota mereka terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia. Mereka juga memainkan peran penting dalam mendukung pendudukan tidak sah Indonesia dan bertanggung jawab, bersama dengan partai politik lain, dalam menciptakan polarisasi dalam masyarakat Timor dan berlanjutnya siklus kekerasan yang diakibatkannya.

Tanggung jawab negara

Tanggung jawab Negara Indonesia

Pelanggaran hak atas penentuan nasib sendiri

Komisi berkesimpulan bahwa Negara Republik Indonesia bertanggung jawab karena mengabaikan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri dan melakukan pendudukan militer yang dicirikan oleh represi dan kekerasan, yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

Komisi berkesimpulan bahwa pada 1974 Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa Timor-Leste harus digabungkan dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia berketetapan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan berbagai taktik termasuk propaganda, intimidasi, subversi, dan akhirnya, kekerasan militer. Proses ini mengabaikan keinginan rakyat Timor dan hak mereka atas penentuan nasib sendiri.

Komisi berkesimpulan bahwa sidang ‘Majelis Rakyat’ 31 Mei 1976 bukan merupakan tindakan penentuan nasib sendiri yang murni. Proses ini direayasa oleh Indonesia untuk memberi kesan legitimasi kepada invasi yang tidak sah. Majelis Rakyat bukan wakil sah rakyat Timor dan tidak memberikan pilihan nyata dan berdasar pemahaman atas berbagai opsi kepada mereka yang terlibat. Komisi berkesimpulan bahwa proses ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tertuang dalam Resolusi Sidang Umum PBB 1541 untuk integrasi wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri ke dalam suatu Negara yang sudah berdiri. Proses ini tidak memungkinkan rakyat Timor untuk secara bebas mengekspresikan keinginan mereka, tidak terjadi dalam suatu konteks di mana rakyat Timor-Leste telah memiliki suatu pemerintahan sendiri yang cukup mantap untuk bisa mengekspresikan keinginan

mereka secara layak, dan tidak terjadi dalam hubungan yang setara antara dua pihak. Komisi berkesimpulan bahwa 'Majelis Rakyat' direkayasa oleh Indonesia untuk membenarkan invasinya dan bukan untuk memberikan rakyat Timor pilihan yang nyata mengenai masa depan mereka.

Indonesia mempertahankan kehadirannya yang tidak sah di wilayah Timor-Leste sampai 1999. Selama periode ini Indonesia bertanggung jawab karena terus mengabaikan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri. Indonesia secara paksa menekan seruan untuk penentuan nasib sendiri di Timor-Leste, dan berupaya menetralkan seruan untuk penentuan nasib sendiri baik oleh rakyat Timor, warga Indonesia, maupun masyarakat sipil internasional. Komisi berkesimpulan bahwa ini merupakan pelanggaran berat hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya seperti hak kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berserikat.

Selama pendudukan, Indonesia terus melanggar hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri dengan mengeksploitasi sumberdaya alam wilayah ini untuk kepentingannya sendiri, bukannya memberikan kesempatan kepada rakyat Timor untuk mengelola sumberdaya mereka. Aparat pemerintah Indonesia membawa sejumlah besar kayu, kayu cendana, dan sumberdaya lain dari Timor-Leste, dan pasukan keamanan Indonesia secara paksa menerapkan program di mana petani kopi Timor menerima uang yang jauh lebih sedikit untuk kopi mereka dibanding nilai sebenarnya. Kesepakatan yang dibuat dengan Australia pada 1989 untuk mengelola sumberdaya alam di Laut Timor (Perjanjian Celah Timor), yang dibuat tanpa melibatkan atau mempertimbangkan rakyat Timor, juga melanggar hak-hak tersebut, terutama karena keinginan Indonesia untuk mencapai kesepakatan secara cepat Indonesia bersedia menandatangani kesepakatan yang sangat tidak menguntungkan untuk Indonesia bila dibandingkan dengan perjanjian serupa yang dilakukan di wilayah lain di Indonesia.

Tanggung jawab negara atas pelanggaran yang dilakukan anggota pasukan keamanan Indonesia dan petugas pemerintah

Menurut hukum internasional suatu negara bertanggung jawab atas perilaku lembaganya (Pasal 4, ILC Pasal tentang Tanggung jawab Negara atas Tindak Pelanggaran Internasional). Ini termasuk tentara, polisi, serta lembaga-lembaga pemerintahan sipil. Karena itu Komisi menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas tindakan ABRI (baik TNI dan polisi pada 1999) serta tindakan unsur sipil pemerintahan Indonesia.

Negara juga bertanggung jawab menurut hukum internasional atas tindakan pribadi-pribadi di mana Negara mempunyai kontrol atas orang tersebut, atau di mana orang-orang tersebut bertindak atas perintah atau arahan negara (Pasal 8, ILC Pasal mengenai Tanggung jawab Negara atas Tindak Pelanggaran Internasional). Komisi percaya bahwa kelompok milisi di Timor-Leste, yang mungkin bukan merupakan lembaga resmi Negara Indonesia, bagaimanapun juga bertindak atas perintah dan

arahan dan berada di bawah kontrol Indonesia. Indonesia karena itu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan kelompok-kelompok milisi ini.

Invasi Indonesia atas Timor-Leste merupakan pelanggaran sejumlah prinsip hukum internasional, termasuk:

- Larangan menurut hukum kebiasaan internasional tentang intervensi di negara lain¹¹
- Aturan jelas yang tertuang dalam Pasal 2(4) Piagam PBB, serta dalam hukum kebiasaan internasional, tentang pemakaian kekerasan yang tidak sah terhadap integritas wilayah negara lain
- Kewajiban Indonesia menurut hukum kebiasaan internasional untuk menghargai hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri .

Indonesia juga melanggar kewajibannya menurut kesepakatan 5 Mei 1999 antara Indonesia, Portugal, dan PBB. Menurut kesepakatan ini Indonesia bertanggung jawab “menjaga ketertiban dan keamanan di Timor-Leste untuk menjamin agar Jajak Pendapat bisa diselenggarakan secara adil dan aman bebas dari intimidasi, kekerasan, atau gangguan dari pihak manapun.”¹² Indonesia juga bertanggung jawab menurut kesepakatan untuk menjamin suatu “suasana bebas dari kekerasan atau bentuk intimidasi lain” dan “menjaga ketertiban dan hukum”, termasuk menjamin “netralitas absolut TNI dan Polisi Indonesia”.¹³ Komisi berkesimpulan bahwa Indonesia tidak memenuhi kewajiban ini dan karena itu melanggar kewajiban yang tertuang dalam kesepakatan 5 Mei.

Komisi berkesimpulan bahwa Negara Indonesia bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum kriminal internasional yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan kelompok binaan mereka, termasuk kelompok pertahanan sipil seperti Hansip dan Ratih, kelompok milisi yang dikontrol oleh pasukan keamanan Indonesia, pegawai pemerintah, polisi, dan orang-orang lain yang melakukan pelanggaran atas perintah lembaga negara. Tanggung jawab ini meliputi berbagai insiden tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembinasaaan; kejahatan perang, termasuk pelanggaran berat Konvensi Jenewa; puluhan ribu pelanggaran hak asasi manusia; dan tanggung jawab secara keseluruhan atas kematian paling tidak 120.000 orang Timor akibat program pelanggaran sistematis yang terjadi selama 24 tahun pendudukan militer yang tidak sah di Timor-Leste.

Sifat dan skala pelanggaran yang termasuk dalam tanggung jawab Negara Indonesia dibicarakan secara terperinci dalam berbagai bab tematik dalam laporan ini, dan khususnya dalam segmen mengenai tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia, pada awal Bagian ini.

Tanggung jawab Negara Portugal

Komisi berkesimpulan bahwa dalam berbagai pemerintahannya, Portugal melanggar hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri.

Konteks sejarah pelanggaran

- Untuk hampir seluruh periode pemerintahannya di Timor-Leste Portugal menciptakan suatu iklim yang samasekali tidak mendukung realisasi hak untuk menentukan nasib sendiri. Tidak ada upaya untuk mencapai tingkat pemerintahan sendiri yang bahkan paling minim bagi rakyat Timor, dan nilai-nilai demokrasi tidak ditegakkan baik secara teoretis maupun dalam praktik. Di bawah rezim Salazar-Caetano, Portugal: mengabaikan ekonomi rakyat Timor dan karena itu ikut menciptakan persepsi internasional mengenai Timor sebagai wilayah yang secara ekonomi tidak punya harapan dan yang tidak akan mampu bertahan hidup sebagai negara merdeka.
- Tidak mempersiapkan rakyat Timor untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan menciptakan partisipasi politik yang luas atau mengajarkan nilai-nilai demokratis.
- Menolak mengakui Pasal 73 Piagam PBB yang memberlakukan Timor sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri dan tidak mematuhi kewajibannya sesuai ketentuan tersebut.*

Setelah Revolusi Anyelir pada 25 April 1974 dan komitmen dekolonisasi dari pemerintah yang dibentuk setelahnya, beberapa kemajuan bisa dilihat. Khususnya, Gubernur Timor Portugis terakhir, Kolonel Mário Lemos Pires, memulai sebuah program reformasi dan mencoba membangun konsensus mengenai program dekolonisasi, yang kemudian ditetapkan dalam undang-undang. Namun demikian, meskipun ia menjalankan upaya ini, berbagai indikasi yang bertentangan dari berbagai pemerintahan yang sesudahnya mengenai tujuan mereka sesungguhnya menciptakan kecurigaan terhadap pemerintah Portugis di Timor dan meningkatkan kecurigaan yang sudah ada di antara partai politik. Gubernur Lemos Pires menerima dukungan yang tidak memadai dari Pemerintah Portugis untuk program reformasinya. Selain permintaannya untuk menambah personel pasukan Portugis untuk menghadapi ketegangan politik yang semakin meningkat ditolak, hanya ada kekuatan militer yang cukup untuk melindungi warga Portugal saja. Akibatnya, saat kekerasan muncul pada Agustus 1975 Portugal tidak mampu melakukan campur tangan. Kehadiran pasukan dalam jumlah yang begitu kecil tidak bisa membendung pasukan keamanan Indonesia dan para perancang strategi Indonesia, saat tujuan Indonesia menjadi semakin jelas melalui propaganda, pelatihan untuk orang Timor di Atambua, dan kegiatan terselubungnya di wilayah ini. Portugal menolak campur

.....
* Pasal 73 mewajibkan Portugal meningkatkan kesejahteraan rakyat Timor sebaik mungkin, termasuk memastikan, dengan menghargai budaya Timor, perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan, memberikan perlakuan yang adil, dan perlindungan dari penganiayaan; serta mengembangkan pemerintahan sendiri di Timor, termasuk pengembangan lembaga politik yang bebas.

tangan PBB secara langsung dalam proses dekolonisasi meskipun ketegangan meningkat di wilayah ini. Penolakan ini dilakukan meskipun ada rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah Portugal di Timor dan dari Gubernur untuk menginternasionalisasi proses dekolonisasi melalui PBB.

Selain itu, kegiatan diplomatik Portugal dengan Indonesia hanya mendorong dan bukannya menekan aspirasi Indonesia untuk menggabungkan Timor. Dalam pertemuan antara pejabat Indonesia dan Portugal di Lisabon pada Oktober 1974, saat posisi pejabat Portugal ialah bahwa rakyat Timor harus diberi kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri, Pemerintah Indonesia diberi kesan bahwa Pemerintah Portugal lebih suka wilayah ini digabungkan dengan Indonesia. Pejabat Portugal juga memberikan pesan yang sama kepada mitranya dari Indonesia pada pertemuan di London pada Maret 1975.

Komisi menilai bahwa Portugal harus bertanggung jawab atas tindakannya selama periode ini. Khususnya kebijakan Portugal berdampak pada meningkatnya ketegangan dengan mendorong ambisi integrasi Indonesia dan dengan secara eksplisit berdiam diri mengenai dukungan Indonesia kepada Apodeti yang meningkatkan konflik politik antarpantai. Langkah yang tidak memadai diambil untuk mencegah peningkatan ketegangan politik, dan sedikit atau tidak ada persiapan samasekali untuk menghadapi kemungkinan pecahnya perang sipil.

Setelah pertemuan di Roma pada 1 dan 2 November 1975, Indonesia dan Portugal bersama-sama menyerukan pemulihan keamanan di Timor tetapi tidak membuat pernyataan mengenai penyusupan militer Indonesia ke wilayah ini. Hampir sebulan kemudian, pada 29 November, saat menolak Deklarasi Kemerdekaan Fretilin, Portugal mengutuk intervensi militer Indonesia, tetapi tetap pada pendirian bahwa dalam mencari pemecahan perbedaan politik antara Fretilin, UDT, dan Apodeti, “kepentingan geopolitik Indonesia atas wilayah ini” harus dipertimbangkan. Hanya setelah invasi skala penuh Indonesia pada 7 Desember Portugal mengajukan persoalan Timor ke Dewan Keamanan PBB, dengan meminta bantuan PBB.

Dalam pandangan Komisi, Portugal mengambil langkah yang tidak memadai untuk mencegah invasi Indonesia yang jelas bisa diperkirakan. Meskipun Portugal akhirnya meminta bantuan masyarakat internasional, Portugal seharusnya melakukan ini lebih awal. Dengan alasan ini Komisi berkesimpulan bahwa Portugal tidak memenuhi kewajibannya sebagai penguasa, termasuk kewajiban untuk melindungi rakyat Timor-Leste dari bahaya.

Sepanjang hampir keseluruhan periode pendudukan Indonesia, Portugal melakukan sedikit upaya diplomatik untuk memecahkan persoalan di Timor-Leste, baik secara bilateral maupun melalui PBB. Meskipun Portugal mempertahankan posisi resminya bahwa Portugal tetap menjadi penguasa di Timor-Leste, Portugal mengambil sedikit langkah untuk memenuhi kewajibannya sebagai konsekuensi dari perannya ini. Baru pada 1982 Portugal mulai mempertanyakan persoalan Timor-Leste di forum internasional, dan bahkan setelah itu langkah yang diambil Portugal tidak memadai untuk mementahkan upaya diplomatik Indonesia. Komisi berkesimpulan bahwa

Portugal, meskipun mempunyai komitmen secara teoretis terhadap hak rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri, tidak mengambil langkah yang memadai untuk merealisasikan hak ini selama pendudukan Indonesia.

Tanggung jawab Negara Australia

Komisi berkesimpulan bahwa Australia mempunyai andil yang besar dalam mengabaikan hak rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri sebelum dan sesudah pendudukan Indonesia. Australia berada dalam posisi untuk memengaruhi jalannya peristiwa di Timor-Leste. Alih-alih memainkan peran sebagai perantara yang jujur, antara April dan Desember 1975 Australia sangat mendukung posisi Indonesia mengenai Timor-Leste, membenarkan posisi ini karena perlunya mempertahankan hubungan dengan Indonesia, yang “kebijakan tetapnya” dipahami Australia sebagai penggabungan wilayah ini dengan cara apapun. Australia mengambil posisi ini meskipun melanggar kewajibannya sesuai hukum internasional untuk mendukung hak rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri.

Setelah Revolusi Anyelir, Pemerintah Gough Whitlam secara jelas mengatakan kepada Presiden Soeharto bahwa dia setuju dengan keinginan Indonesia bahwa Timor-Leste harus digabungkan dengan Indonesia. Dalam pembicaraannya dengan Presiden Soeharto, Whitlam mengatakan bahwa kebijakan Australia mengenai Timor didasarkan pada dua prinsip: Keyakinannya bahwa Timor harus menjadi bagian Indonesia; dan keinginannya agar hal ini terjadi dengan persetujuan rakyat Timor. Ketika menjadi jelas bahwa kedua unsur kebijakan ini saling bertentangan, unsur kedua dikorbankan. Meskipun hubungannya dengan pejabat di Jakarta dan data intelijen yang dikumpulkan di lapangan di Timor-Leste sangat jelas menunjukkan bahwa, jika perlu, Indonesia bermaksud mengambilalih wilayah ini secara paksa, Australia tidak menyatakan keberatan. Upayanya untuk menyenangkan Pemerintah Soeharto tecermin dengan diamnya Australia saat warganya sendiri meninggal di Balibó (Bobonaro) pada 16 Oktober 1975 dan di Dili pada 8 Desember 1975.

Komisi berkesimpulan bahwa kebijakan Australia tentang Indonesia dan Timor-Leste selama periode ini dipengaruhi tidak hanya oleh kepentingannya mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia, tetapi juga oleh penilaiannya bahwa Australia akan bisa mengambil keuntungan dalam perundingan mengenai batas maritim di Timor apabila melakukan perundingan dengan Indonesia dan bukannya Portugal atau sebuah negara Timor-Leste yang merdeka.

Komisi juga berkesimpulan dari penelitiannya mengenai catatan dokumen bahwa cara Australia mempresentasikan pendiriannya memperkuat keinginan Pemerintah Indonesia untuk mengambilalih wilayah Timor-Leste. Ketidakpedulian Australia kepada tindakan Indonesia untuk mencapai tujuannya, yang mencakup penyusupan ke wilayah ini, jelas mempunyai dampak yang sama. Sebaliknya, seandainya Australia lebih mempertimbangkan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri dan kedaulatan wilayahnya yang tidak bisa dihapuskan dalam berhubungan dengan Indonesia, Australia mungkin bisa menghindari pemakaian

kekerasan oleh Indonesia. Komisi berkesimpulan bahwa selama pendudukan Indonesia berbagai pemerintahan Australia tidak hanya mengabaikan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, tetapi secara aktif terlibat dalam pelanggaran hak rakyat Timor. Setelah mendukung Resolusi pertama pada 1975 pemerintah Australia menentang atau abstain dari resolusi-resolusi Majelis Umum PBB setelahnya yang mengakui hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri. Pemerintah Australia menolak menerima José Ramos-Horta atau wakil Fretilin lain, dan bahkan melarang mereka masuk ke Australia selama beberapa tahun. Pada 1978 Pemerintah Australia mengakui secara *de facto* kekuasaan Indonesia atas Timor-Leste, dan secara implisit memberikan pengakuan *de jure* pada 1979 saat Pemerintah Australia memulai perundingan dengan Indonesia mengenai penentuan batas maritim antara Australia dan Timor-Leste. Pada 1985 Pemerintah Australia secara terang-terangan memberikan pengakuan *de jure* pada integrasi Timor-Leste ke Indonesia, dan pada 1989 menyelesaikan Perjanjian Zona Kerjasama Celah Timor dengan Indonesia. Australia juga memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Indonesia selama periode ini dan berupaya membela posisi Indonesia di forum internasional.

Australia memainkan peranan utama dalam pasukan Interfet yang akhirnya mengakhiri kekerasan seputar Jajak Pendapat 1999, dan sebagai konsekuensi menggambarkan dirinya sebagai pembebas Timor-Leste. Namun demikian Komisi berkesimpulan bahwa bahkan ketika Presiden Habibie akan memberikan tawaran kepada rakyat Timor antara pilihan tetap menjadi bagian dari Indonesia dan merdeka, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, menegaskan bahwa Pemerintahnya yakin bahwa butuh beberapa tahun sebelum rakyat Timor bisa melaksanakan hak mereka untuk membuat pilihan itu dan bahwa Australia lebih suka Timor-Leste secara hukum tetap sebagai bagian dari Indonesia. Tindakan Pemerintah Australia mendukung upaya Indonesia untuk secara paksa menggabungkan Timor-Leste melanggar kewajibannya, sesuai prinsip umum hukum internasional, untuk mendukung dan menahan diri agar tidak mengabaikan hak sah rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri¹⁴ dan mengambil tindakan positif untuk membantu realisasi hak ini.¹⁵ Menurut Komite Hak Asasi Manusia:

Negara harus menahan diri agar tidak mencampuri urusan internal Negara lain yang berakibat buruk pada realisasi hak penentuan nasib sendiri.¹⁶

Tindakan Australia selama periode pendudukan militer Indonesia yang tidak sah di Timor-Leste benar-benar, dalam kenyataan, berpengaruh buruk terhadap kemampuan rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri.

Tanggung jawab Amerika Serikat

Komisi berkesimpulan bahwa Amerika Serikat tidak mendukung hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, dan bahwa dukungan politik dan militernya sangat penting dalam invasi dan pendudukan Indonesia. Dukungan Amerika Serikat kepada Indonesia diberikan karena kepentingan strategis untuk mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia, di mana rezim antikomunisnya dinilai sebagai benteng penting menghadapi penyebaran paham komunis di Asia Tenggara. Presiden Gerald Ford bertemu Presiden Soeharto dua kali. Pertemuan kedua terjadi di Jakarta pada 6 Desember, satu hari sebelum invasi ke Dili, saat invasi juga dibicarakan. Komisi berkesimpulan, berdasar bukti dokumenter yang ada, bahwa Amerika Serikat sadar akan rencana Indonesia untuk menginvasi dan menduduki Timor-Leste. Komisi juga berkesimpulan bahwa Amerika Serikat sadar bahwa perlengkapan militer yang dipasok kepada Indonesia akan digunakan untuk invasi tersebut. Namun demikian, berdasar analisisnya mengenai pentingnya menjalin hubungan baik dengan Indonesia, Amerika Serikat memutuskan menutup mata mengenai invasi tersebut, meskipun senjata dan peralatan militer pasokan Amerika pasti digunakan.

Persenjataan yang dipasok Amerika Serikat sangat penting untuk kapasitas Indonesia meningkatkan operasi militer sejak 1977 dalam kampanye besar-besaran untuk menghancurkan Resistansi di mana pesawat terbang yang dipasok Amerika Serikat memainkan peran penting. Kampanye ini menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang hebat puluhan ribu penduduk sipil yang berlindung di perdalaman saat itu. Kampanye ini memaksa menyerahnya puluhan ribu penduduk sipil, yang kemudian ditahan dalam kondisi yang sangat dibatasi di kamp-kamp permukiman di mana ribuan penduduk sipil meninggal akibat kelaparan dan penyakit. Dalam kelaparan saat itu pejabat pemerintah Amerika Serikat menolak mengakui bahwa alasan utama rakyat Timor mati dalam jumlah ribuan adalah kebijakan keamanan yang diterapkan militer Indonesia. Sebaliknya, mereka bersikukuh bahwa kematian ini karena kekerasan, suatu argumen yang menurut Komisi tidak berdasar.

Pemerintahan-pemerintahan berikutnya, bahkan pemerintahan Carter yang membesar-besarkan komitmennya terhadap hak asasi manusia, juga dipengaruhi oleh realisme kaku dalam merumuskan kebijakan mengenai Timor-Leste: mereka semua secara konsisten menekankan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan pengambilalihan yang tidak bisa diubah, bahkan saat mereka mengakui bahwa hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri diabaikan.

Meskipun Amerika Serikat membatalkan kerjasama militer dengan Indonesia setelah pembantaian Santa Cruz pada 1991, kebijakannya mengenai Timor-Leste mengenai hal ini dan kesempatan lain bersifat reaktif bukannya proaktif. Menanggapi pelanggaran besar-besaran yang terjadi di Timor-Leste pada September 1999 Presiden Clinton menggunakan pengaruh besar Amerika Serikat untuk menekan Pemerintah Indonesia untuk menerima kehadiran pasukan internasional di wilayah ini, yang menunjukkan pengaruh besar yang bisa digunakan lebih awal apabila Amerika Serikat mau.

Dalam pandangan Komisi, dukungan yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia sangat penting dalam invasi dan pendudukan Timor-Leste yang berkelanjutan. Ini bukan hanya karena senjata dan perlengkapan yang dibeli dari Amerika Serikat memainkan peran yang penting dalam operasi militer Indonesia di Timor, tetapi juga karena Amerika Serikat tidak pernah menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menekan sekutunya Indonesia agar tidak melakukan tindakan yang tidak sah.

Tindakan Pemerintah Amerika Serikat dalam mendukung invasi Indonesia atas Timor-Leste melanggar kewajibannya, menurut prinsip umum hukum internasional, untuk mendukung dan menahan diri agar tidak mengabaikan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri¹⁷ dan untuk melakukan tindakan positif guna merealisasikan hak tersebut.¹⁸

Tanggung jawab PBB

Komisi berkesimpulan bahwa PBB mengambil tindakan yang tidak memadai untuk melindungi hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri selama periode invasi dan pendudukan.

Sidang Umum mengeluarkan resolusi mengenai situasi di Timor-Leste setiap tahun dari 1975 sampai 1982. Selama periode ini teks resolusi semakin melemah dan sejumlah negara yang memilih mendukung resolusi semakin berkurang, sampai 1981 hanya sekitar sepertiga negara anggota PBB menyetujui resolusi yang mendukung resolusi tahun itu. Pada 1982, dalam suatu langkah strategis yang diambil guna tetap mempertahankan persoalan Timor-Leste di PBB di tengah-tengah tanda yang jelas tentang ketidakpedulian negara-negara anggota, wakil Resistansi di luar negeri dan pendukung mereka di PBB bisa mendapatkan dukungan Sidang Umum dengan suara sedikit untuk sebuah resolusi yang meminta “jasa baik” Sekretaris Jenderal untuk berkonsultasi dengan “semua pihak yang terlibat” Meskipun mekanisme ini nyaris sepenuhnya tidak melibatkan orang Timor dan dampak langsungnya untuk mendapatkan pengakuan atas hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri dapat diabaikan, dengan dukungan usaha staf Sekretaris PBB dan kemudian Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, resolusi ini membantu mempertahankan persoalan Timor-Leste dalam agenda PBB, yang terbukti sangat penting pada 1998-99.

Dewan Keamanan, sebagai lembaga PBB yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24[1] Piagam PBB), berada pada posisi paling sesuai untuk menyelesaikan persoalan Timor-Leste. Meskipun Dewan Keamanan mengutuk invasi Indonesia pada 1975 dan sekali lagi pada 1976, Dewan tidak menemukan adanya pelanggaran atau ancaman perdamaian dan keamanan internasional. Komisi menilai bahwa tidak diragukan bahwa Dewan Keamanan bisa melakukan hal ini menurut Pasal 39 Piagam PBB dan karena itu seharusnya bisa

* Lihat bagan yang menunjukkan suara negara-negara dalam Sidang Umum saat pengambilan suara mengenai resolusi Timor-Leste, dalam Bab 7.1: Hak atas penentuan nasib sendiri.

melakukan tindakan penegakan hukum sesuai Pasal VII. Setelah 1976 tidak ada lagi resolusi Dewan Keamanan dikeluarkan mengenai persoalan Timor-Leste sampai Mei 1999, ketika Dewan menandatangani Kesepakatan 5 Mei antara Indonesia, Portugal, dan PBB.

Menurut Pasal 24(2) Piagam PBB Dewan Keamanan diwajibkan bertindak sesuai tujuan dan prinsip PBB seperti yang tertuang dalam Pasal 1 dan 2 Piagam PBB. Tujuan dan prinsip ini termasuk:

- Menjaga perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 1[1])
- Pengembangan hubungan bersahabat antarnegara berdasar penghormatan atas prinsip hak yang sama dan hak atas penentuan nasib sendiri (Pasal 1[2])
- Meningkatkan dan mendorong penghargaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar (Pasal 1[3])
- Kesetaraan kedaulatan semua negara anggota (Pasal 2[1])

Komisi berkesimpulan bahwa karena tidak melakukan tindakan untuk menegakkan hukum, dan dengan tidak melakukan tindakan lagi antara 1976 dan 1999, Dewan Keamanan tidak memenuhi kewajiban sesuai prinsip dan tujuan PBB serta kewajiban khusus yang tertuang dalam Piagam lembaga ini .

Lebih jauh, Komisi berkesimpulan bahwa dalam sebagian besar periode pendudukan Indonesia, lima anggota tetap Dewan Keamanan—Amerika Serikat, Rusia/USSR, Cina, Inggris, dan Prancis—serta negara-negara seperti Jepang yang menjadi anggota tidak tetap pada saat genting selama periode mandat, mengutamakan kepentingan ekonomi dan strategis di atas tujuan dan prinsip PBB, yang harus mereka junjung tinggi sebagai anggota Dewan Keamanan. Seperti juga Amerika Serikat, dengan menyetujui penjualan senjata yang digunakan melawan Resistansi dan penduduk sipil Timor-Leste, Inggris dan Prancis secara langsung terlibat dalam mendukung pendudukan tidak sah serta mengabaikan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri.

Lampiran 1:

Tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia atas pelanggaran yang dilakukan pada 1999.

Pendahuluan

Latar belakang sejarah Jajak Pendapat 1999 dibicarakan secara terperinci dalam Bagian 3 Laporan: Sejarah Konflik.

Bukti yang dipertimbangkan

Pernyataan dari korban dan saksi yang diterima Komisi melaporkan adanya 15.681 pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Timor-Leste 1999. Selain itu Komisi juga mempertimbangkan bukti yang diberikan selama wawancara dengan saksi dan korban, termasuk mantan anggota TNI, polisi Indonesia, anggota milisi, dan pegawai pemerintah Indonesia. Komisi juga diberi izin melihat dokumen dan pernyataan khusus yang dimintakan dari Unit Kejahatan Berat, yang dibentuk oleh misi UNTAET dan yang berada di bawah wewenang Jaksa Agung Timor-Leste sejak merdeka. Dokumen ini termasuk dokumen dan pernyataan yang dipakai untuk membuat dakwaan atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor-Leste selama 1999. Unit Hak Asasi Manusia UNTAET dan UNMISSET juga bekerjasama dengan Komisi dengan memberi izin kepada Komisi untuk melihat materi yang relevan dengan pelanggaran yang dilakukan pada 1999.

Komisi juga secara hati-hati mempertimbangkan submisi dari Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) yang berjudul *East Timor 1999: Crimes Against Humanity, a Report Commissioned by the United Nations High Commissioner for Human Rights* (Timor-Leste 1999: Laporan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB) yang ditulis oleh Dr. Geoffrey Robinson dari Universitas California, Los Angeles (Amerika Serikat) atas permintaan OHCHR. Dr. Robinson mempunyai akses ke dokumen Unit Hak Asasi Manusia UNTAET, pernyataan dan dokumen lain yang dikumpulkan oleh Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat, koleksi dokumen yang dipulihkan dari instalasi TNI dan lokasi lain yang terbakar yang ditemukan oleh LSM hak asasi manusia Timor yang ternama yaitu Yayasan HAK, serta melakukan wawancara sendiri dengan korban, saksi, dan sumber lain. Komisi juga mempunyai akses ke banyak materi dokumenter yang dicermati Dr. Robinson dan mengambil kesimpulan yang sama berdasar sumber-sumber ini, dan mencermati bukti yang disajikan dalam laporan ini. Komisi menilai bahwa metodologi yang dipakai dalam menyusun submisi dari Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB sangat menyeluruh, objektif, dan sangat profesional. “Robinson Report” (Laporan Robinson), yang disebut dalam laporan ini secara umum sebagai “Robinson, Submisi OHCHR kepada CAVR”, dikutip secara penuh dalam Lampiran dalam Laporan ini.

Sebuah ringkasan tentang pelaku pelanggaran yang bertanggung jawab menurut pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan ke Komisi oleh saksi mata dan korban dimasukkan dalam tabel. Rangkaian tabel yang lengkap yang menunjukkan jumlah serta persentase pelanggaran yang dilakukan berbagai lembaga pelaku disajikan dalam Lampiran pada Bagian Laporan ini.

Tabel 15 – Pelanggaran oleh kelompok pelaku utama yang dilaporkan, 1999

| | Total jumlah pelanggaran yang dilaporkan ke CAVR | Total Pelanggaran oleh Militer, Polisi Indonesia, & kelompok binaan Timor | Total pelanggaran oleh Fretilin/ Falintil | Lain-lain |
|----------------------------------|--|---|---|-----------|
| Semua pelanggaran | 15.681 | 14.922 | 129 | 630 |
| | 100% | 95,20% | 0,80% | 4,00% |
| Pembunuhan tidak sah | 840 | 761 | 31 | 48 |
| | 100% | 90,60% | 3,70% | 5,70% |
| Penghilangan | 60 | 51 | 2 | 7 |
| | 100% | 85,00% | 3,30% | 11,70% |
| Penyiksaan dan penganiayaan | 4.324 | 4.083 | 52 | 146 |
| | 100% | 94,4 | 1,20% | 3,40% |
| Penahanan | 2779 | 2.634 | 24 | 121 |
| | 100% | 94,80% | 0,90% | 4,40% |
| Penganiayaan | 2.098 | 1,982 | 8 | 108 |
| | 100% | 94,50% | 0,40% | 5,10% |
| Kekerasan seksual | 142 | 136 | 2 | 4 |
| | 100% | 95,80% | 1,40% | 2,80% |
| Pemindahan paksa | 2111 | 2070 | 0 | 41 |
| | 100% | 98,10% | | 1,90% |
| Perekrutan paksa | 392 | 390 | | 2 |
| | 100% | 99,50% | | 0,05% |
| Pelanggaran harta benda/ ekonomi | 2.766 | 2.673 | 9 | 84 |
| | | 96,60% | 0,30% | 3,10% |

(Catatan: karena lebih daripada satu kelompok pelaku yang terlibat dalam pelanggaran tertentu persentase totalnya mungkin tidak 100%)

Tabel 16 - Perincian tanggung jawab pasukan keamanan Indonesia, menurut pelanggaran yang dilaporkan, 1999

| | Total Pelanggaran oleh Militer, Polisi, dan kelompok binaan Timor | Kelompok binaan Timor yang bertindak sendiri | Militer dan polisi Indonesia yang bertindak sendiri | Militer dan polisi Indonesia bersama kelompok binaan Timor |
|----------------------------------|--|---|--|---|
| Semua pelanggaran | 14.922 | 8.827 | 2.198 | 3.822 |
| | 95,20% | 56,30% | 14,00% | 24,40% |
| Pembunuhan tidak sah | 761 | 417 | 84 | 258 |
| | 90,60% | 49,60% | 10% | 30,70% |
| Penghilangan | 51 | 29 | 15 | 7 |
| | 85,00% | 48,30% | 25% | 11,70% |
| Penyiksaan dan penganiayaan | 4.083 | 2.310 | 805 | 968 |
| | 94,4 | 53,40% | 18,60% | 22,40% |
| Penahanan | 2.634 | 1.209 | 529 | 890 |
| | 94,80% | 43,50% | 19% | 32% |
| Penganiayaan | 1.982 | 1.173 | 341 | 465 |
| | 94,50% | 55,90% | 16,30% | 22,20% |
| Kekerasan seksual | 136 | 93 | 31 | 11 |
| | 95,80% | 65,50% | 21,80% | 7,70% |
| Pemindahan paksa | 2.070 | 1.264 | 187 | 607 |
| | 98,10% | 59,90% | 8,90% | 28,80% |
| Perekrutan paksa | 390 | 283 | 32 | 71 |
| | 99,50% | 72,20% | 8,20% | 18,30% |
| Pelanggaran harta benda/ ekonomi | 2.673 | 1.910 | 32 | 563 |
| | 96,60% | 69,10% | 8,20% | 20,40% |

(Catatan: Karena lebih daripada satu kelompok pelaku mungkin terlibat dalam pelanggaran tertentu persentasenya totalnya mungkin tidak 100%)

Tanggung jawab Indonesia untuk menjaga keamanan dan melindungi penduduk sipil

Menurut Kesepakatan 5 Mei 1999 antara Indonesia, Portugal, dan PBB, pasukan keamanan Indonesia diberi tanggung jawab untuk “menjaga ketertiban dan keamanan di Timor-Leste untuk menjamin agar Jajak Pendapat [bisa] diselenggarakan secara adil dan aman atau tanpa campurtangan pihak manapun”.¹⁹ Kesepakatan lebih lanjut menyatakan bahwa:

Sebuah lingkungan yang aman bebas dari kekerasan atau bentuk intimidasi lain merupakan syarat untuk melaksanakan Jajak Pendapat yang bebas dan adil di Timor-Leste. Tanggung jawab untuk menjamin lingkungan semacam ini serta tertib hukum ada di tangan penguasa Indonesia yang sesuai. Netralitas absolut dari TNI dan Polisi Indonesia sangat penting dalam hal ini.²⁰

Meskipun menurut Kesepakatan 5 Mei tanggung jawab satu-satunya untuk menjaga tertib hukum ada di tangan polisi,²¹ pada kenyataannya polisi tetap berada di bawah TNI bahkan setelah restrukturisasi pada 1 April 1999.^{*}

Setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat pada 4 September 1999, TNI sekali lagi mengambilalih kontrol keamanan di Timor-Leste.²² Pada 6 September Presiden Indonesia, B.J. Habibie, memerintahkan berlakunya keadaan darurat, mulai pukul 12 malam pada 7 September.²³ Setelah itu TNI mempunyai tanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga tertib hukum di Timor. Tanggung jawab ini tidak berakhir sampai kedatangan pasukan multilateral, Interfet, yang disponsori oleh PBB pada 20 September 1999.

Pelaku pelanggaran

Anggota militer Indonesia, polisi, dan kelompok binaan Timor (termasuk kelompok milisi) dikenal sebagai pelaku dalam 14.922 (95,2%) pelanggaran yang dilaporkan ke Komisi yang terjadi 1999.

Untuk menentukan tanggung jawab, Komisi mengelompokkan bersama pelanggaran yang dilakukan oleh TNI, polisi Indonesia, dan kelompok binaan Timor, termasuk milisi, karena banyaknya bukti bahwa TNI memainkan peran utama dalam menciptakan kelompok milisi, dan bertanggung jawab dalam mempersenjatai, membiayai, mengarahkan, dan mengontrol mereka. Bukti yang mendukung temuan ini diperinci sebagai berikut:

.....
* Pada 1 April 1999 keputusan untuk merestrukturisasi pasukan keamanan Indonesia ditetapkan. Dampaknya ialah secara resmi dipisahkannya tiga cabang angkatan bersenjata (Angkatan Darat, Laut, dan Udara) dari polisi. ABRI dengan demikian secara resmi berhenti, dan ketiga angkatan bersenjata kemudian dikenal dengan nama TNI. Namun demikian, Menteri Pertahanan (saat itu Jenderal Wiranto) tetap memegang wewenang atas TNI dan polisi, dan seperti dinyatakan dalam teks, pemisahan antara polisi dan militer pada kenyataannya tidak mengakhiri subordinasi polisi dari militer, seperti jelas terlihat di Timor-Leste selama bulan-bulan setelahnya pada 1999.

Hanya sebagian kecil pelanggaran dilakukan oleh orang yang dikenal mempunyai hubungan dengan Fretilin, Falintil, UDT, Apodeti, atau kelompok lain.⁷

Tanggung jawab TNI atas pelanggaran

Anggota TNI terlibat dalam keseluruhan perencanaan dan koordinasi pelanggaran yang dilakukan pada 1999. Mereka juga sering terlibat secara langsung sebagai pelaku. Selain itu mereka juga terlibat dalam tindakan bersama kelompok milisi yang mereka arahkan dan kontrol.

Anggota TNI sebagai pelaku pelanggaran

Insiden besar di mana anggota TNI terlibat langsung, baik sendiri maupun bersama milisi yang mereka arahkan, termasuk berikut:

- Pada 6 April 1999 sekitar 2.000 penduduk sipil yang mencari perlindungan di Gereja Liquiçá diserang oleh milisi Besi Merah Putih, bersama tentara dari Kodim Liquiçá dan anggota Brimob. Antara 30 dan 100 penduduk terbunuh, kebanyakan mayat mereka dibawa dan dibuang ke lokasi rahasia.
- Pada 12 April 1999, sebagai balasan menurut cerita atas pembunuhan seorang tentara TNI dan pemimpin pro-otonomi oleh Falintil, ratusan penduduk sipil di desa di Subdistrik Cailaco (Bobonaro) dikumpulkan dan disuruh menghadiri pemakaman pemimpin pro-otonomi. Paling tidak tujuh orang yang dicurigai sebagai pendukung prokemerdekaan dieksekusi oleh tentara TNI dan milisi Halilintar di pos Koramil 100 meter dari orang-orang yang hadir. Paling tidak 13 orang laki-laki dieksekusi di berbagai lokasi selama minggu-minggu berikutnya.
- Pada 17 April 1999 sebuah demonstrasi pro-otonomi dilakukan di depan Kantor Gubernur di Dili yang dihadiri Gubernur, Bupati Dili, Komandan Korem Timor-Leste, Kolonel Tono Suratman, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, dan empat perwira senior. Selama demonstrasi para pemimpin Timor dari kelompok milisi Aitarak secara terbuka mendorong pengikutnya untuk membunuh pendukung prokemerdekaan. Sesaat setelah demonstrasi ini anggota milisi dan pasukan keamanan pergi ke rumah tokoh prokemerdekaan terdekat, Manuel Carrascalão, di mana sekitar 150 orang pengungsi berlindung. Mereka membunuh paling tidak 12 penduduk sipil tidak bersenjata yang berlindung di rumah itu.²⁴
- Pada 6 September 1999 anggota milisi Laksaur, bersama anggota pasukan keamanan Indonesia, menyerang ribuan pengungsi yang berlindung di Gereja Suai di Distrik Covalima. Paling tidak 40 dan kemungkinan sebanyak 200 orang terbunuh, termasuk tiga pendeta.²⁵ Mayat mereka dibakar, dan beberapa dibawa ke perbatasan dan dikubur di Timor Barat, Indonesia.

* Meskipun partai politik UDT dan Apodeti tidak lagi secara resmi ada di Timor-Leste setelah 1976, banyak orang tetap mengenal pelaku lewat hubungan mereka dengan partai-partai ini, sampai 1999.

- Setelah pembantaian di Gereja Suai, sekitar 125 korban perempuan dan anak-anak ditahan oleh milisi Laksaur dengan bantuan anggota TNI. Banyak perempuan ini diperkosa. Korban hidup dipaksa dibawa ke Timor Barat di mana banyak yang diperkosa atau dijadikan budak seksual.
- Pada 5-6 September 1999 milisi Aitarak, bersama anggota TNI menyerang ratusan orang yang berlindung di sejumlah lokasi di Dili, termasuk di rumah Pemenang Hadiah Nobel Uskup Carlos Ximenes Belo, kantor Dioses, biara, dan kantor Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Dili. Paling tidak 19 penduduk sipil terbunuh atau hilang dari tempat-tempat pengungsian ini. Sehari sebelumnya, pada 4 September, TNI dan milisi melakukan serangan terhadap masyarakat di Becora, suatu masyarakat prokemerdekaan di timur Dili, dan membunuh paling tidak tujuh orang.
- Pada 8 September 1999 milisi Dadurus Merah Putih dan milisi lainnya, di bawah komando pasukan keamanan Indonesia, menyerang orang-orang yang berlindung di kantor polisi Maliana. Sebelum menyerang, pemimpin organisasi payung prokemerdekaan CNRT meminta polisi Indonesia melindungi mereka. Tetapi polisi tidak bertahan di satu bagian gedung dan menyuruh mereka pergi. Paling tidak 26 penduduk sipil terbunuh atau dihilangkan, kebanyakan pemimpin CNRT setempat dan orang-orang yang dicurigai mendukung CNRT, termasuk satu anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban termasuk orang-orang yang lari dari kantor polisi yang diburu dan dibunuh beberapa hari berikutnya. Mayat mereka dibawa ke tempat rahasia untuk dibuang.
- Pada 10 September 1999 milisi Sakunar, di bawah arahan TNI, membawa penduduk sipil dari tiga desa di Oesilo, Oecussi ke Timor Barat, Indonesia, dengan alasan mereka akan lebih aman di sana. Setelah tiba di wilayah Indonesia, TNI dan milisi memisahkan 50-70 anak muda yang dipilih atas dasar bahwa mereka mempunyai pendidikan SMA. Korban diikat bersama dan dibawa kembali ke Oecussi, di mana mereka disuruh berdiri sejajar dan dieksekusi di Sungai Passabe.
- Pada 12 September 1999, milisi Laksaur dan anggota TNI mencoba secara paksa untuk membawa penduduk Desa Laktos (Fohorem, Covalima) ke Timor Barat, Indonesia. Empat belas orang yang menolak dibunuh.
- Pada 20-21 September 1999 tentara TNI dari Batalion 745 menembak penduduk sipil secara membabi buta saat mereka menarik diri dari Lospalos (Lautém) ke Dili. Paling tidak 21 penduduk sipil, termasuk seorang wartawan Belanda, terbunuh atau dlenyapkan oleh anggota Batalion 745 saat mereka menarik diri melalui Lospalos, Baucau, dan Dili.
- Pada 23 September 1999, anggota milisi Mahiri, didukung oleh TNI, menembak sekelompok penduduk desa dari Maununu, Distrik Ainaro, yang baru saja mereka kumpulkan untuk dibawa ke Timor Barat, dan membunuh 11 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

- Pada 20 Oktober 1999 milisi Sakunar dan Aitarak dan anggota TNI, saat mengumpulkan penduduk desa dari Maquelab (Pante Makassar, Oecussi) untuk dibawa ke Timor Barat, memisahkan dan mengeksekusi sebanyak enam penduduk laki-laki di pasar Maquelab. Enam orang lainnya dibunuh kemudian dalam serangan di desa tersebut.

Selain insiden besar ini, Komisi menerima banyak laporan mengenai pelanggaran oleh perorangan yang dilakukan oleh anggota TNI, baik sendiri maupun bersama milisi Timor. Di antaranya ada laporan tentang berbagai perkosaan, kadang dilakukan berulang-ulang selama periode beberapa hari, dalam konteks kampanye teror secara umum sebelum dan sesudah Jajak Pendapat atau selama deportasi setelah Jajak Pendapat. Komisi menerima lebih daripada 4.000 laporan mengenai penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh atau dengan melibatkan TNI atau polisi Indonesia. Komisi menerima sekitar 731 laporan terpisah mengenai perusakan harta benda atau pelanggaran ekonomi yang melibatkan TNI dan polisi (lihat Bab 7.4.: Penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan).

Bukti yang diberikan oleh korban dan saksi dalam wawancara dengan Komisi, dan data statistik yang dikumpulkan dari pernyataan yang dikumpulkan oleh Komisi jelas memperkuat temuan bahwa anggota TNI secara langsung terlibat dalam sejumlah besar pelanggaran berat selama 1999.

Tanggung jawab TNI atas tindakan kelompok milisi

Tanggung jawab TNI atas tindakan kelompok milisi mempunyai tiga dasar. Pertama TNI terlibat dalam merancang, merekrut, mendanai, mempersenjatai, dan melatih kelompok milisi. Kedua TNI ikutserta dalam operasi gabungan dengan kelompok milisi. Dan ketiga, meskipun mengetahui sifat dan skala pelanggaran yang dilakukan, TNI tidak mengambil tindakan efektif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut atau menghukum pelaku.

Peran TNI dalam membentuk dan mendukung milisi

Dalam membentuk milisi TNI mengambil dari berbagai kelompok binaan yang sudah dikerahkan TNI sejak 1975. Beberapa kelompok milisi pada kenyataannya sudah ada selama satu dekade atau lebih. Kelompok milisi lain merekrut pemimpinnya dari pasukan “pertahanan sipil” serta kelompok prointegrasi yang secara resmi didukung oleh Indonesia seperti Wanra, Hansip, dan Gadapaksi. Sebuah dokumen militer tertanggal April 1998 menunjukkan bahwa 12 “tim” paramiliter, yang berada di setiap distrik di Timor-Leste kecuali Dili dan Oecussi, sudah ada waktu itu. Struktur yang sudah ada sangat membantu dalam pembentukan kelompok baru dan perluasan kelompok yang sudah ada, dan menjelaskan mengapa milisi bisa dimobilisasi dengan cepat pada 1999.

Tiga perwira senior tentara Indonesia terlibat dalam perencanaan, pembentukan, dan perekrutan milisi. Tiga komandan senior yang memainkan peran penting

dalam pembentukan kelompok milisi adalah Mayor Jenderal Adam Rachmat Damiri, Komandan Kodam IX/Udayana yang meliputi beberapa provinsi di wilayah Tengah dan Timur Indonesia, termasuk Timor-Leste, Kolonel Suhartono Suratman yang menjadi Komandan Korem Timor Timur, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, seorang perwira Kopassus yang menjadi komandan Satuan Tugas Tribuana VIII yang ditugaskan di Timor-Leste pada awal 1999. Komisi diizinkan melihat material yang dikumpulkan oleh penyelidik internasional PBB yang bekerja untuk Unit Kejahatan Berat PBB. Komisi percaya bahwa pernyataan saksimata yang diambil oleh penyelidik PBB memberikan bukti yang sangat tepercaya. Komisi percaya bahwa pernyataan saksimata dan peserta pertemuan antara tokoh prointegrasi dengan anggota senior TNI dan pemerintah lokal dan pusat secara akurat diringkas dalam pernyataan berikut dari dakwaan terhadap delapan pejabat senior Indonesia yang diajukan oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste urusan Kejahatan Berat pada Februari 2003.²⁶

1. Pada atau sekitar Agustus 1998 [Komandan Kodam IX Udayana, Mayor Jenderal] Adam Rachmat Damiri mengatur penerbangan pemimpin Timor yang pro-Indonesia dari Timor Timur ke Denpasar, Bali untuk suatu pertemuan. Dalam pertemuan ini, Damiri meminta mereka membentuk kelompok untuk mempromosikan integrasi.
2. Pada dan sekitar Agustus 1998 Damiri berkunjung ke Dili dan bertemu para komandan TNI dan pemimpin Timor yang pro-Indonesia. [Komandan Korem 164, Kolonel] Suhartono Suratman hadir dalam pertemuan tersebut. Damiri mengatakan kepada mereka bahwa perhatian internasional tertuju pada Timor Timur dan ini menjadi masalah bagi Indonesia. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu membuat rencana untuk membuat organisasi yang akan menyebarkan semangat pro-Indonesia di seluruh wilayah Timor Timur. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membentuk pasukan pertahanan sipil yang didasarkan pada model yang sebelumnya didukung TNI dan bahwa pasukan ini harus diperluas dan dikembangkan untuk melindungi integrasi.
3. Pada atau sekitar November 1998 Damiri mengunjungi Timor. Dalam kunjungan ini dia bertemu lagi dengan para pemimpin Timor yang pro-Indonesia di Dili, termasuk orang-orang yang nantinya menjadi pemimpin kelompok milisi. Damiri meminta orang-orang ini untuk bergabung dan membantu TNI melawan kelompok prokemerdekaan Fretilin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*). Dalam pertemuan dengan pemimpin pro-Indonesia ini, Damiri memuji pemimpin masa depan milisi Eurico Guterres sebagai anak muda yang bersemangat untuk bertempur mempertahankan integrasi dan berkata bahwa dia siap memberi Guterres 50 juta rupiah untuk memulai kegiatannya.
4. Pada atau sekitar November 1998 Suratman bertemu pemimpin Timor pro-Indonesia di markasnya di Dili. [Komandan Tribuana, Letnan Kolonel] Yayat Sudrajat hadir dalam pertemuan tersebut. Suratman mengatakan kepada orang-orang ini bahwa dia menginginkan pemimpin masa depan

milisi Eurico Guterres untuk membentuk organisasi baru untuk melindungi integrasi yang mirip dengan organisasi pemuda pro-Indonesia Gadapaksi.

5. Pada awal 1999 [Mayor Jenderal] Zacky Anwar Makarim [yang menjadi kepala BIA, sampai Januari 1999] menerima para pendiri Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT) di kantornya di Jakarta. Dalam pertemuan dia mengatakan bahwa perang gerilya perlu untuk mengalahkan pendukung kemerdekaan jika opsi otonomi kalah dalam Jajak Pendapat.
6. Pada atau sekitar Februari 1999 Damiri bertemu pemimpin Timor yang pro-Indonesia di markas Kodam IX di Denpasar, Bali. Damiri mengatakan kepada para pemimpin ini bahwa TNI siap memberi dukungan rahasia kepada kelompok pro-Indonesia. Dia menjelaskan bahwa hal ini harus dirahasiakan untuk menghindari kecaman dan kritik internasional. Damiri meminta orang-orang ini mengumpulkan orang-orang Timor yang pernah bertugas dengan TNI. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus bertemu dengan Suratman untuk mendapat perintah lebih lanjut.
7. Pada atau sekitar Februari 1999 Suratman bertemu pemimpin Timor yang pro-Indonesia di Dili. Dia mengatakan bahwa karena TNI berada di bawah rezim reformasi, TNI tidak bisa terlibat dalam operasi terbuka melawan gerakan kemerdekaan. Suratman meminta pemimpin pro-Indonesia untuk membentuk kelompok milisi. Suratman mengatakan bahwa TNI bersedia memberi bantuan apa saja yang diperlukan kelompok milisi.
8. Pada awal 1999, Gubernur Abilio Soares mendorong bupati untuk membentuk kelompok milisi di setiap distrik (kabupaten). Beberapa bupati menjadi pemimpin milisi.

Pada awal 1999 Kepala Staf Korem Timor Timur, Letnan Kolonel Supardi, dikutip saat mengatakan bahwa TNI telah merekrut 1.200 milisi dan akan terus merekrut sampai Maret.²⁷ Selain menggunakan uang sebagai insentif untuk merekrut, TNI juga menggunakan ancaman dan paksaan. Target ditetapkan dalam perekrutan anggota milisi di setiap distrik, yaitu sekitar 10 orang per desa.²⁸ Ada sekitar 450 desa di Timor-Leste.

Pengakuan TNI atas milisi

Anggota TNI dan pemerintah Indonesia memberi status resmi kepada milisi. Mereka melakukan ini, misalnya, dengan menghadiri dan berbicara di upacara peresmian milisi dan demonstrasi di seluruh Timor-Leste. Komandan Korem, Kolonel Suratman, bertemu dan memberi “pengarahan” kepada anggota milisi Besi Merah Putih (BMP) di Distrik Liquiçá di Markas Kodim pada 16 April 1999, sepuluh hari setelah pembantaian penduduk sipil oleh anggota BMP, TNI, dan polisi di Gereja Liquiçá, dan satu hari sebelum serangan milisi di Dili di mana milisi BMP juga ikut ambil bagian.²⁹

Seperti dicatat sebelumnya, Komandan Korem Timor Timur, Kolonel Suratman, dan perwira lainnya termasuk Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal

Kiki Syahnakri, hadir dalam demonstrasi di depan Kantor Gubernur di Dili, pada 17 April, di mana pemimpin milisi Eurico Guterres berbicara di depan anggota milisi dan mendorong mereka untuk membunuh “mereka yang mengkhianati integrasi”.³⁰ Pembunuhan yang selanjutnya terjadi sudah disebut di atas.

Perwira TNI hadir dan ikutserta dalam upacara peresmian di Cassa (Ainaro) pada 12 Desember 1998; Same (Manufahi) pada 11 Maret 1999; Viqueque (Viqueque) pada 11 Maret 1999; Dili (Dili) pada 17 April 1999; Maliana (Bobonaro) pada April 1999; Suai (Covalima) pada pertengahan April 1999; Oecussi, (Oecussi) pada 1 Mei 1999; Lolotoe (Bobonaro) pada 10 Mei 1999; Laclubar (Manatuto) pada 18 Mei 1999; dan Gleno (Ermera) pada April atau Mei 1999. Komandan Kodim TNI, kepala Polres dan Bupati menghadiri dan ikutserta dalam upacara ini di distrik masing-masing.

Pengakuan milisi sebagai bagian dari struktur resmi

Selain dukungan terbuka, pemerintah Indonesia memberi milisi pengakuan resmi dengan memperlakukan mereka sebagai bagian resmi dari struktur kelompok binaan militer. Dalam sebuah komunikasi internal resmi, kelompok milisi secara teratur disebut sebagai bagian dari kelompok pertahanan sipil yang sudah ada, Wanra, Hansip, atau Ratih. Sebuah surat yang ditandatangani perwira Kopassus di Distrik Baucau tertanggal Maret 1999, menyebut kelompok milisi Saka, Sera, dan Alfa sebagai “Ratih”.³¹ Dari 1999, kelompok milisi juga secara resmi diakui sebagai Pam Swakarsa.³² Menganggap milisi sebagai kelompok pertahanan sipil yang secara resmi diakui ditujukan memberi dasar legitimasi bagi TNI dan pemerintah untuk mendukung mereka. Kenyataannya ini memberikan bukti bahwa TNI dan pemerintah Indonesia mengakui kelompok milisi sebagai lembaga resmi yang bertindak di bawah arahan pemerintah.

Pengakuan resmi milisi sampai di tingkat atas Panglima ABRI, Jenderal Wiranto, yang menyatakan bahwa pasukan milisi terdiri atas “angkatan bersenjata” dan basis pendukung masa sebagai “pendukung militan”. Tingkat kontrol yang dimiliki TNI atas milisi tecermin dari pengetahuan TNI tentang jumlah pasti senjata yang mereka miliki. Jenderal Wiranto dikutip dalam Laporan Komnas HAM Indonesia mengenai Timor Timur yang mengatakan bahwa:

Angkatan bersenjata memiliki 1.100 orang dengan 546 senjata dari berbagai jenis, termasuk senjata rakitan; mereka digabungkan ke organisasi prointegrasi. Pendukung militan terdiri atas 11.950 orang, yang digabungkan dalam kelompok oposisi seperti Besi Merah Putih, Aitarak, Mahidi, Laksaur Merah Putih, Guntur Kailak, Halilintar, Junior, Tim Pancasila, Mahadomi, Ablai, dan Red Dragon (Naga Merah).³³

.....
* Lihat, misalnya, Kodim 1631/Manatuto, Laporan Rahasia Situasi Harian, 12 Mei 1999 [Koleksi Yayasan HAK, Dokumen No. 23]

Partisipasi personel TNI dalam kelompok

Hubungan dekat antara TNI dan milisi secara jelas ditunjukkan oleh keanggotaan ganda mereka. Banyak anggota milisi juga terdaftar sebagai tentara TNI, sebuah fakta yang dibenarkan oleh dokumen militer dan pemerintah sipil Indonesia.

- Pada Agustus 1999, pejabat UNAMET menyampaikan sebuah keluhan resmi kepada ketua gugus tugas pemerintah Indonesia yang menangani hubungan dengan misi PBB, Agus Tarmidzi, dan kepada Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, wakil militer di gugus tugas tersebut, bahwa personel TNI, secara khusus dua orang sersan yang bertugas di Kodim Bobonaro, juga bertugas di kelompok milisi Dadurus Merah Putih.[†] Mayor Jenderal Makarim mengakui bahwa kedua orang ini memang anggota TNI dan sekaligus anggota milisi DMP. Sebagai tanggapan atas keluhan UNAMET dia menyatakan bahwa kedua orang ini diperintahkan kembali ke barak. Pejabat UNAMET yang bertugas di Bobonaro menemukan bahwa hal ini tidak benar.³⁴
- Sebuah dokumen 1998 yang mendaftar nama 49 anggota milisi Makikit di Distrik Viqueque menyatakan bahwa enam anggota milisi juga merupakan anggota TNI Batalion Infanteri 328.
- Sebuah surat dari pemimpin milisi Aitarak, Eurico Guterres, kepada Dandim TNI di Dili secara terbuka meminta agar intel TNI Sersan Satu Elizario da Cruz, diberi izin bergabung dengan Aitarak untuk waktu yang tidak terbatas.³⁵
- Sebuah daftar resmi berjudul “Daftar anggota Kompi Khusus Pusaka, Kodim 1628/Baucau”, dari Kodim 1628/Baucau, tertanggal 3 Februari 1999, menunjukkan bahwa ke-91 anggota kelompok milisi Team Saka di distrik Baucau adalah tentara TNI, dan menyebut pangkat militer serta nomor induk mereka. Daftar ini menyebut kelompok milisi sebagai sebuah “kompi khusus” di Kodim 1638 Baucau. Komandan kelompok milisi ini, Joanico Césarío Belo, saat ini berpangkat Sersan Satu di Kopassus dan Komandan Wilayah Sektor A Pasukan Pejuang Integrasi, sebuah lembaga yang membawahi semua milisi nasional.
- Sebuah dokumen yang memerinci upah yang dibayar kepada anggota milisi Aitarak di Dili, tertanggal 24 Agustus 1999, menyebutkan pembayaran kepada 96 anggota kelompok milisi baik yang anggota maupun pegawai pemerintah.[†]
- Komisi menerima bukti bahwa kelompok milisi berikut dikomandani oleh personel TNI yang kebanyakan ada hubungannya dengan Kopassus:
 - DMP (Dadurus Merah Putih), dengan basis di Bobonaro, dengan komandan Sersan Domingos dos Santos

.....
* Sersan Domingos dos Santos dan Sersan Julião Gomes disebut di surat sebagai orang yang aktif sebagai milisi.

† Menurut laporan, ke-96 orang masing-masing dibayar Rp120.000.00. [Lihat: Memorandum dari Bendahara kepada Eurico Guterres mengenai anggaran Aitarak, 28 Agustus 1999, Koleksi Unit Kejahatan Berat, Dokumen No. 79]

- Tim Alfa (juga dikenal sebagai Jati Merah Putih, JMP), dengan markas di Distrik Lautém, dan dipimpin oleh seorang Sersan Kopassus Syaful Anwar dan Letnan Rahman Zulkarnaen (Komandan Kopassus di Distrik Lautém)
- Tim Saka, dengan basis di Distrik Baucau, dengan komandan Joanico Césarío Belo, yang menjadi sersan di Kopassus
- Tim Morok, dengan basis di Distrik Manatuto dan dipimpin oleh anggota TNI Filomeno Lopes da Cruz

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI bersama kelompok milisi

Komisi menerima bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa sudah menjadi praktik umum bagi anggota TNI untuk mengikuti milisi selama operasi dan bahwa dalam banyak kasus perwira TNI memerintahkan anggota milisi untuk melakukan pelanggaran. Dalam banyak kasus anggota milisi mematuhi perintah. Dalam laporan yang jumlahnya lebih sedikit saksi menyatakan bahwa saat anggota milisi tidak mematuhi perintah untuk melakukan pelanggaran, TNI melakukan sendiri pelanggaran tersebut.

Korban dan saksimata memberikan kesaksian dalam pernyataan kepada Komisi mengenai lebih daripada 2.000 pelanggaran berbeda di mana mereka mengenal anggota TNI dan milisi yang bersama-sama sebagai pelaku pelanggaran. Kasus-kasus yang dilaporkan termasuk 761 kasus pembunuhan di luar hukum, 968 kasus penyiksaan dan penganiayaan, 883 kasus penahanan sewenang-wenang, 553 kasus pelanggaran ekonomi dan harta benda, dan 11 kasus pelanggaran seksual.

Dari kesaksian seorang korban pemerkosaan yang mereka wawancarai selama kunjungan lapangan pada akhir 1999, tim gabungan Pelapor Khusus PBB melaporkan pada akhir 1999 bahwa:

[D]alam banyak kesempatan tidak bisa dibedakan antara anggota milisi dan TNI, karena sering orangnya sama tetapi memakai seragam yang berbeda.³⁶

Seorang mantan anggota tentara TNI Timor mengatakan kepada Unit Kejahatan Berat bahwa selama penyerangan setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat:

Gabungan antara milisi Aitarak dan TNI membakar rumah di Subdistrik Metinaro. Rumah-rumah dibakar secara membabibuta ...Ini karena kami tidak diizinkan meninggalkan apapun milik Indonesia untuk pendukung prokemerdekaan ...Perintah masih tetap sama: jika otonomi kalah, Timor Timur akan kembali dari nol...Saya sadar situasi buruk di Dili karena kami lihat banyak asap di atas Dili. Kami tidak bisa mengenal lagi siapa TNI dan siapa milisi, milisi menggunakan senjata yang sama dengan TNI.³⁷

TNI mengarahkan tindakan milisi

Selain tentara TNI yang menjadi anggota kelompok milisi banyak perwira berperan mengarahkan milisi. Komisi menerima banyak laporan bahwa anggota TNI yang mengikuti anggota milisi selama insiden di mana korban dibunuh, disiksa, atau menderita pelanggaran lainnya, mengarahkan milisi. Komisi menerima bukti yang diberikan oleh banyak saksi mata, termasuk mantan anggota TNI dan milisi, bahwa TNI secara langsung mengontrol tindakan kelompok milisi. Pemenang Hadiah Nobel Uskup Carlos Ximenes Belo, menggambarkan serangan di rumahnya pada pagi hari 6 September:

Kemudian sekitar pukul 09.15 seorang Letnan Kolonel dari Kostrad tiba... Dia bertanya: "Bagaimana situasi di sini?" Saya jawab bahwa kami ingin perlindungan untuk menghentikan serangan milisi ...tetapi orang-orang lain di rumah saya mendengar Letnan Kolonel tersebut ...tiba di ujung jalan ... Dia berteriak kepada milisi yang menunggu di sana: "Serang sekarang, Serang sekarang! Jika tidak saya akan bunuh kalian." Sekitar pukul 09.30 mereka mulai mengelilingi rumah saya dengan sepeda motor, berteriak dan melempar batu ...Pemuda di rumah saya kemudian berkata kepada saya bahwa polisi sendiri juga melempar bensin ke api waktu itu.³⁸

TNI mempersenjatai milisi

TNI juga memberikan latihan, senjata, dan dukungan operasional kepada milisi. Peran TNI dalam mempersenjatai dan melatih milisi dikuatkan oleh berbagai sumber termasuk dokumen pemerintah dan militer Indonesia dan pernyataan saksi mata yang bisa dipercaya.

Pada awal Februari 1999 Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, mengatakan bahwa tentara mempersenjatai "Wanra" untuk membantu ABRI mengamankan Timor Timur.³⁹ Pada pertengahan Februari juru bicara ABRI di Jakarta, Jenderal Sudradjat, menegaskan bahwa senjata telah disalurkan kepada milisi tetapi menekankan bahwa "kami hanya memberikan senjata kepada mereka yang kita percaya".⁴⁰

Pada saat yang sama pemimpin milisi Mahidi di Distrik Ainaro, Cancio Lopes de Carvalho, mengatakan kepada wartawan bahwa TNI telah memberi kelompoknya 20 senapan otomatis SKS buatan Cina pada akhir Desember 1998, yang kemudian sudah dipakai untuk melakukan sejumlah serangan mematikan di desa-desa sekitar.⁴¹

Daftar nama 91 anggota milisi Tim Saka di Distrik Baucau yang disebut di atas juga memerinci jenis dan nomor registrasi senjata yang diberikan kepada setiap anggota. Senjata yang masuk dalam daftar termasuk: 1 PMI/Pindad, 19 G-3, 56 SP-II, 10 SP-I, 1 FNC, 1 M16A1, 1 AK, dan 1 Mauser. Dokumen ini ditandatangani oleh Joanico Césarío Belo, yang diketahui sebagai Sersan Satu dan Komandan Kompi Khusus Pusaka.⁴²

Sebuah dokumen berjudul “Daftar Anggota Tim Makikit yang Diizinkan Membawa Senjata,” yang dipersiapkan oleh Kodim Viqueque, mendaftar lebih daripada 49 anggota milisi Makikit dan memerinci jenis dan nomor registrasi senjata yang diberikan kepada setiap anggota. Senjata yang masuk di daftar termasuk 3 M16A-1, 35 SP-1, dan 11 Garand. Meskipun tidak tercantum tanggal pada dokumen tersebut, catatan di pinggir menyatakan bahwa dokumen ini ditemukan di markas Kodim Viqueque pada 28 Oktober 1998.⁴³

Pada April 2000 seorang pemimpin kelompok milisi Sakunar di Oecussi, Laurentino Moko, dilaporkan memberi kesaksian di hadapan pengadilan Indonesia bahwa dia diberi senjata pada 1999 oleh dua perwira Kopassus.⁴⁴

Dalam pengadilannya atas kejahatan terhadap kemanusiaan di hadapan Panel Khusus di Pengadilan Distrik Dili, pemimpin milisi Tim Alfa Joni Marques mengatakan bahwa dia dilatih oleh Kopassus sejak 1986, dan menerima senjata dari perwira Kopassus setelah Jajak Pendapat 30 Agustus.⁴⁵ Marques dan orang lainnya divonis dengan kejahatan atas kemanusiaan karena membunuh suster, pendeta, dan orang-orang lain pada 25 September 1999. Dalam keputusannya Pengadilan Distrik Dili menyimpulkan: “Pasukan Khusus Kopassus memberi senjata dan pelatihan kepada anggota Tim Alfa”.⁴⁶

TNI melatih milisi

Dalam sebuah telegram kepada semua Dandim tertanggal 13 April 1999 dan diberi tanda “rahasia”, Kolonel Suratman, Komandan Korem Timor Timur mengakui bahwa milisi (yang dikenal dengan nama “Ratih”) sedang dilatih personel TNI di semua distrik. Ini memberi bukti kuat bahwa program dukungan kepada milisi dikontrol dan dikelola paling tidak di tingkat Korem. Kolonel Suratman memerintahkan Komandan Kodim untuk:

Melaksanakan pengawasan dan kegiatan pengamanan dalam konteks pelatihan setiap Ratih agar kegiatan ini berjalan mulus [dan] menekankan perlunya melaksanakan perintah dan disiplin untuk mencegah adanya kerugian, baik fisik maupun nonfisik, ataupun di dalam maupun di luar unit.⁴⁷

Dalam dokumen lain, yang diidentifikasi sebagai laporan intelijen TNI dari Kodim Liquiçá, tertanggal 18 April 1999, penulis menggambarkan kunjungan Kolonel Suratman ke distrik itu. Dokumen ini menyatakan bahwa Suratman berbicara di depan masa anggota milisi Besi Merah Putih yang berkumpul di pos Koramil Maubara (Liquiçá) hanya dua minggu setelah kelompok milisi yang sama, bersama TNI dan polisi, membunuh puluhan penduduk sipil tidak bersenjata di kompleks Gereja Liquiçá.

Pada 16 April 1999 pukul 14.00, Danrem 164/WD Kolonel Suratman dan pengawalnya tiba di markas Kodim Liquiçá. Kemudian dia mengunjungi pos Koramil 1638/ Maubara untuk memberi pengarahan kepada sekitar 500 anggota milisi BMP di sana.⁴⁸

Penggunaan secara resmi instalasi TNI oleh kelompok milisi

Dalam sebuah telegram tertanggal 18 April 1999 Komandan Kodim TNI di Dili, Letnan Kolonel Endar Priyanto, melaporkan kepada atasannya, Kolonel Tono Suratman, bahwa:

Pada pukul 13.15 pada 18 April 1999 satu unsur pasukan Aitarak menyelesaikan operasi pembersihannya dan kembali ke Kompi B Batalion 744/SYB di mana mereka bergabung dengan kelompok Aitarak lain yang telah berkumpul di sana. Mereka kemudian kembali ke Hotel Tropical.⁴⁹

Laporan ini tertanggal satu hari setelah demonstrasi milisi di depan Kantor Gubernur di Dili di mana pemimpin milisi Eurico Guterres, didampingi perwira senior TNI dan pejabat pemerintah, menyuruh anggota milisi membunuh pendukung kemerdekaan. Laporan menyebutkan bahwa milisi menggunakan basis TNI sebagai tempat berkumpul sebelum dan sesudah “operasi pembersihan” hanya satu hari setelah serangan mematikan yang dilakukan setelah demonstrasi itu, di mana milisi membunuh paling tidak 12 orang di rumah Manuel Carrascalão di Dili.

Di Distrik Lautém Kopassus menyediakan markasnya untuk basis kelompok milisi Tim Alfa dan memberi dukungan logistik dan transportasi.

Paling tidak di dua subdistrik di Distrik Covalima markas milisi Laksaur berada di markas Koramil. Sebuah tim UNAMET mengunjungi salah satu basis milisi ini di kompleks TNI pada Juni 1999.⁵⁰

Di Liquiçá, Koramil di Maubara juga berfungsi sebagai markas milisi Besi Merah Putih.

Kelompok milisi menggunakan markas resmi TNI sebagai basis di seluruh wilayah ini.⁵¹

Senjata diberikan, dan kontrol penggunaan senjata ini dilakukan oleh TNI.⁵² Komisi menerima banyak laporan tentang milisi yang dipersenjatai dengan senjata modern dengan model dan jenis yang sama dengan yang dipakai militer dan polisi Indonesia.⁵³

Komisi mencermati dan menerima bukti dalam pernyataan saksi dan dokumen yang dikumpulkan oleh Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat di Timor-Leste mengenai sebuah pertemuan pada Maret 1999 yang dihadiri oleh Kolonel Suhartono Suratman dan Letnan Kolonel Sudrajat, Perwira Kopassus yang menjadi komandan Gugus Tugas Intel Satgas Tribuana VIII dan gubernur sipil Abilio Soares.⁵⁴ Pada pertemuan tersebut Abilio Soares mengatakan kepada para pemimpin pro-otonomi bahwa TNI dan dia akan memasok senjata dan dana. Senjata kemudian disalurkan kepada milisi oleh Letnan Kolonel Sudrajat.

Pada April 1999 Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang menjadi wakil militer dalam gugus tugas PT33 yang ditugaskan berhubungan dengan misi UNAMET,

menawarkan untuk memasok kelompok milisi dengan senjata otomatis dan memberi instruksi kepada Kolonel Suratman agar ini dilaksanakan. Kolonel Suratman memerintahkan Letnan Kolonel Sudrajat untuk mengatur distribusi senjata. Senjata kemudian disalurkan kepada milisi melalui personel Kopassus.⁵⁵

Penyediaan dukungan dana dan material oleh TNI dan lembaga lain

Ada bukti melimpah yang menunjukkan bahwa penguasa sipil dan militer Indonesia mendanai milisi dan memberikan sumberdaya untuk mereka gunakan. Diperkirakan sekitar 5,2 juta dolar Amerika dikeluarkan untuk program “sosialisasi” yang bertujuan untuk meyakinkan penduduk bahwa mereka harus memilih tetap bersama Indonesia. Sekitar 400.000 dolar Amerika dijatah untuk setiap distrik. Sebagian dari uang ini dialokasikan untuk membayar kelompok milisi melalui pemerintahan sipil Indonesia.⁵⁶ Anggaran dasar untuk “sosialisasi otonomi” dibuat oleh setiap distrik, yang meliputi alokasi untuk milisi, dan diajukan kepada gubernur untuk disetujui.⁵⁷ Dana tambahan diberikan oleh lembaga pemerintah lain dan TNI.

Komisi mencermati sejumlah dokumen yang berisi anggaran dan permintaan uang dari milisi yang ditandatangani oleh pemimpin milisi, yang ditujukan kepada pejabat pemerintah dan perwira militer. Komisi percaya bahwa pendanaan kelompok milisi sebagian besar diambil dari program “Jaringan Pengamanan Sosial” Bank Dunia, yang seharusnya diberikan kepada kelompok rentan.⁵⁸

Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa kelompok politik prointegrasi, seperti FPDK (Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan) dan BRTT (Barisan Rakyat Timor Timur), keduanya memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah sipil, dipakai untuk menyalurkan dana dari pemerintah dan militer ke milisi (lihat Bagian 4: Rezim Pendudukan).⁵⁹

FPDK diketuai oleh Bupati Dili, Domingos (Koli) Maria das Dores Soares, sementara BRTT diketuai oleh Francisco Lopes da Cruz, mantan Presiden UDT yang menjadi Wakil Gubernur Timor Timur selama pendudukan dan yang pada 1999 menjadi duta besar keliling yang ditugaskan untuk mempromosikan Timor-Timur di dunia internasional.⁶⁰

Kemampuan TNI mengontrol milisi dan tingkat kekerasan yang dilakukan

Panglima TNI, Jenderal Wiranto, sendiri tampaknya mengatakan dalam beberapa kesempatan bahwa TNI bisa melucuti senjata milisi apabila mereka mau. Dalam pernyataannya kepada Unit Kejahatan Berat, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB dalam misi UNAMET, Ian Martin, mengatakan bahwa dalam pertemuan 7 Juli 1999 di Jakarta:

Saya jelas mengingat Jenderal Wiranto mengatakan kepada saya bahwa jika Falintil siap menyerahkan senjata kepada polisi Indonesia, dia menjamin bahwa milisi bisa dilucuti dalam waktu dua hari ... Saya yakin ini bukan satu-satunya kesempatan Jenderal Wiranto mengatakan ini.⁶¹

Seorang anggota Polisi Sipil UNAMET PBB, Stephen Polden, memberikan kesaksian kepada Unit Kejahatan berat bahwa dia mengamati kemampuan perwira TNI berpakaian sipil untuk menghentikan serangan milisi di kompleks UNAMET di Maliana pada 29 Juni 1999.⁶²

Bukti berlimpah dan bukti dokumenter menunjukkan bahwa milisi yang dikontrol dan diarahkan oleh TNI juga dikuatkan oleh fakta bahwa TNI bisa menghentikan kekerasan milisi pada saat tertentu sebelum Jajak Pendapat, khususnya selama kunjungan tamu internasional dan, yang lebih penting, lembaga pengawas.

Pada 28 Januari 1999 Kolonel Suratman mengeluarkan perintah kepada semua Komandan Kodim di mana dia secara jelas berasumsi bahwa komandan Kodim di setiap kabupaten mempunyai kontrol atas milisi, termasuk senjata mereka, dan bahwa mereka bisa memanggil milisi dan melucuti senjata mereka apabila mau. Perintah ini juga menunjukkan bahwa komandan TNI mempunyai peran untuk memastikan bahwa milisi dipersenjatai secara layak saat melakukan operasi tempur dan tugas lain. Perintah itu menyebut pembunuhan yang baru dilakukan oleh milisi dan kemudian mengarahkan perwira TNI untuk mencegah milisi agar tidak membawa dan menggunakan senjata yang berada di bawah kontrol TNI selama kunjungan yang akan dilakukan oleh utusan Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Perlu dicatat bahwa penyebutan tentang pembunuhan tidak dalam konteks tindakan apapun terhadap milisi yang terlibat pembunuhan, hanya bahwa program mereka harus dihentikan selama kunjungan kelompok hak asasi manusia.⁶³

Dalam perintah resmi Suratman menyebut “rencana kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia PBB ke Timor Timur pada 9 Februari 1999” dan “sejumlah kasus yang telah terjadi di Timor Timur yang melibatkan Wanra (persisnya, milisi) yang mengakibatkan hilangnya nyawa.” Perintah itu kemudian menyatakan:

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kalian diperintahkan untuk ...menarik kembali senjata yang dibawa Wanra dan Ratih anggota [milisi] apabila mereka tidak melakukan tugas khusus atau operasi tempur di wilayah Kodim masing-masing.⁶⁴

Dalam contoh lain, pada 12 April, Kolonel Suratman mengeluarkan perintah lewat telegram sebagai tanggapan adanya kunjungan berbagai “tamu asing”— termasuk Atase Militer, Duta Besar, dan LSM—ke Timor-Leste, dan terutama ke Liquiçá, yang menyatakan bahwa “untuk menghindari kritik tentang operasi teritorial kita oleh para tamu asing ini, untuk sementara kegiatan harus dibatasi pada operasi keamanan dasar.”⁶⁵

Tidak bertindak TNI untuk mencegah kekerasan milisi

TNI mempertahankan jumlah pasukan yang tinggi di Timor-Leste sepanjang 1999 sampai mengundurkan diri pada September. Pasukan ditugaskan di distrik, subdistrik, dan desa di seluruh wilayah ini. Meskipun demikian, dan meski dengan adanya fakta bahwa anggota TNI ada di berbagai tempat saat pelanggaran hak asasi manusia terjadi, TNI tidak mencegah kekerasan milisi.

Satu contoh adalah penolakan komandan TNI untuk melakukan campurtangan guna mencegah pembantaian di rumah Manuel Carrascalão di Dili pada 17 April 1999. Perwira senior TNI ada saat terjadi demonstrasi sebelum pembantaian, di mana Eurico Guterres berbicara dan mengatakan bahwa milisi segera memulai “pembersihan” Dili dari mereka yang menentang integrasi. Mereka melihat amukan milisi di seluruh Dili. Sore harinya saat Manuel Carrascalão mengunjungi rumah Kolonel Suratman untuk meminta bantuan segera guna mencegah serangan milisi terhadap orang-orang yang berlindung di rumahnya, Suratman menolak melakukan apapun.⁶⁶

Satu contoh ketidakmampuan menjaga keamanan ialah saat TNI menolak mengambil langkah apapun untuk mencegah penganiayaan dan deportasi penduduk sipil di Dili pada 5 dan 6 September, meskipun ada permintaan pribadi dari Uskup Belo langsung kepada Jenderal Wiranto, Kapolda, Kolonel Timbul Silaen, dan Danrem (Komandan Resort Militer) Timor Timur, Kolonel Noer Muis. Bukannya mengambil langkah untuk mencegah deportasi, personel TNI mengambil peran aktif dalam menggalang dan memindahkan mereka yang dipaksa pergi.

Komisi menilai bahwa tidak ada bukti substantif yang mendukung argumen bahwa pasukan keamanan Indonesia tidak mampu mencegah kekerasan kelompok milisi. Lebih jauh, Komisi menilai bahwa ada bukti kuat yang berlimpah yang memperkuat temuan bahwa mereka bisa dengan mudah menghentikan kekerasan tetapi tidak melakukan hal tersebut. Kenyataannya, persoalannya bukan mencegah kekerasan, karena pasukan keamanan Indonesia merekayasa dan terlibat langsung dalam kekerasan. Tidak ada penjelasan lain yang mungkin tentang ketidakmampuan tentara TNI untuk melucuti anggota milisi yang melanggar hukum Indonesia dan menjadi ancaman keamanan utama dengan membawa senjata secara terbuka.

Seorang mantan staf internasional misi UNAMET memberikan kesaksian tentang permintaannya kepada seorang tentara TNI untuk menangkap anggota milisi yang membawa granat setelah diumumkannya keadaan darurat:

Dia [tentara itu] berkata kepada saya: “Kami tidak menerima perintah untuk melakukan hal itu.” Saya terkejut dengan hal itu, dan sangat ingat hal itu ...[B]agi saya, itu berarti mereka mendapat perintah untuk tidak menangkap milisi, karena membawa senjata itu melanggar hukum. Mereka tidak perlu perintah untuk menangkap orang yang membawa senjata, tetapi mereka perlu perintah sebaliknya untuk tidak menangkap mereka.⁶⁷

Pada Agustus 1999 ada 17.941 pasukan reguler TNI di Timor-Leste. Selain itu, ada lebih daripada 6.500 polisi Indonesia yang bertugas. TNI merupakan tentara modern yang dilengkapi dengan senjata modern dengan dukungan pesawat udara, helikopter tempur, artileri, dan perlengkapan militer berat lainnya. Militer Indonesia menunjukkan kemauannya untuk menggunakan berbagai persenjataan ini di Timor-Leste selama 24 periode pendudukan. Polisi juga dilengkapi dengan senjata modern, gas air mata, dan peralatan lain yang sesuai untuk mengontrol

perilaku tidak sah. Kelompok milisi relatif tidak terlatih, dibentuk secara tergesa-gesa, dan terdiri atas orang Timor yang tidak berpendidikan, yang kebanyakan sangat muda.

Apabila ada upaya sungguh-sungguh oleh pasukan keamanan Indonesia untuk mengontrol tindak kekerasan yang dilakukan milisi, maka, paling tidak, ada konfrontasi bersenjata antara anggota pasukan keamanan Indonesia dan kelompok milisi dan banyak penangkapan oleh polisi. Tidak ada konfrontasi seperti itu, dan juga tidak ada penangkapan besar-besaran, meskipun ada ribuan polisi dan dilakukannya ribuan pelanggaran menurut KUHP. Komisi menilai sebagai kebohongan penjelasan mengenai sebuah pasukan militer dan polisi yang terorganisasi dan bersenjata lengkap, terdiri atas lebih daripada 20.000 personel, yang tidak bisa menguasai kelompok orang-orang nonprofesional yang jauh lebih kecil jumlahnya, dan kebohongan ini semakin jelas karena tidak ada bukti adanya upaya sungguh-sungguh untuk mencegah kekerasan atau menghukum pelaku.

Pengetahuan, ancaman, dan peringatan TNI sebelum kekerasan massal September 1999

Beberapa peringatan yang dikeluarkan jauh sebelum Jajak Pendapat menjadi awal dari penghancuran dan kekerasan yang mengikuti pengumuman hasil Jajak Pendapat. Komandan militer TNI di Timor Timur, Kolonel Tono Suratman, mengatakan dalam sebuah wawancara dalam program Televisi Australia tiga bulan sebelum Jajak Pendapat:

Saya ingin memberi kalian peringatan ini: jika pihak prokemerdekaan menang, bukan pemerintah Indonesia yang akan menanggung akibatnya. PBB dan Australia harus menyelesaikan masalah dan, yah, jika ini terjadi, maka tidak akan ada pemenang. Semua akan dihancurkan. Timor Timur tidak akan ada lagi seperti sekarang. Ini akan lebih buruk dibanding 23 tahun yang lalu.⁶⁸

Selain itu Unit Kejahatan Berat menerima bukti bahwa pada Juni 1999 Kolonel Suratman mengadakan pertemuan di Dili di mana dia mengatakan kepada tentara TNI dan milisi bahwa apabila rakyat Timor memilih merdeka dalam Jajak Pendapat semua yang diberikan Indonesia kepada Timor-Leste harus dihancurkan, bahwa kebijakan bumihangus akan dilancarkan agar Timor-Leste merdeka harus mulai dari nol, dan bahwa perintah ini harus dilaksanakan oleh semua pasukan di Timor-Leste.⁶⁹

Tidak jelas sejauh mana peringatan ini mencerminkan kebijakan tetap pemerintah mengenai konsekuensi memilih kemerdekaan dan bukannya hanya ancaman yang dirancang untuk memastikan hasil yang prointegrasi.* Namun demikian, fakta bahwa

* Sebuah laporan yang ditulis Mayor Jenderal (purnawirawan) HR Garnardi pada Juli 1999 untuk atasannya, Menteri Koordinator urusan Politik dan Keamanan yang sangat berkuasa, Letnan Jenderal (purnawirawan) Faisal Tanjung, paling tidak menunjukkan bahwa penghancuran fasilitas dan infrastruktur

peringatan ini dikeluarkan oleh perwira senior militer setelah penandatanganan Kesepakatan 5 Mei paling tidak menunjukkan keberpihakan yang tidak sejalan dengan kewajiban Indonesia sesuai kesepakatan. Lebih jauh, fakta bahwa peringatan ini menjadi kenyataan dengan adanya kekerasan dan penghancuran yang dilakukan TNI dan sekutu milisinya setelah Jajak Pendapat menunjukkan bahwa peringatan tersebut bukanlah peringatan kosong.

Tidak bertindakya TNI untuk menghukum pelaku/ penghargaan lembaga kepada mereka yang terlibat

Komisi menilai bahwa ketidakmampuan TNI untuk menyelidiki atau melakukan tindakan disipliner terhadap anggotanya atas tindakan mereka di Timor-Leste pada 1999, di samping bukti berlimpah keterlibatan langsung pasukan TNI dalam pelanggaran, menunjukkan bahwa di tingkat senior lembaga tidak menganggap pelanggaran-pelanggaran tersebut perlu dihukum. Apabila dipertimbangkan dengan bukti-bukti lain tentang keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung seperti dibicarakan di atas, Komisi berkesimpulan bahwa personel TNI yang melakukan pelanggaran tidak dihukum atas partisipasi mereka dalam kekerasan karena mereka bertindak sesuai dengan, tidak menentang, perintah atasan.

Menurut prinsip tanggung jawab komando, tidak bertindakya komandan TNI untuk mencegah dan mengontrol bawahan mereka agar tidak melakukan pelanggaran dan menghukum mereka yang bertanggung jawab, saat mereka tahu secara langsung bahwa pelanggaran terjadi, menjadikan mereka bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut.*

Bukan saja pelaku dan komandan mereka tidak diminta pertanggungjawaban hukum, mereka bahkan tidak dihukum melalui mekanisme kelembagaan. Orang akan mengira bahwa kegagalan para komandan menjaga keamanan meski dengan sumberdaya lebih daripada mencukupi untuk menguasai situasi setidaknya akan merusak karier mereka. Kenyataannya, sebaliknya yang terjadi. Sejumlah komandan senior diberi penghargaan dengan promosi setelah mereka memainkan peran kunci dalam peristiwa di Timor-Leste. Komisi menilai ini bukti lebih jauh bahwa di tingkat senior TNI tidak mengutuk peran yang dimainkan perwira senior ini, tetapi sebaliknya menyetujui.

Perwira senior TNI yang mendapat promosi setelah kejadian 1999 termasuk:

- Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, yang menjadi Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat dan kemudian sebagai Komandan Keadaan Darurat memainkan peran kunci di Timor-Leste pada 1999, dinaikkan jabatannya menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada November 2000

dibicarakan di kalangan atas pada saat itu. Akan tetapi, "Dokumen Garnardi" yang disebarluaskan tidak memberi bukti kuat bahwa suatu kebijakan 'bumihangus' yang jelas sudah disusun sebelum Juli [lihat juga Laporan Robinson, Bab 5.3].

* Prinsip tanggung jawab komando dirangkum sebelumnya dalam Bagian ini dan secara rinci di Bagian 2: Mandat Komisi.

- Mayor Jenderal Adam Rachmat Damiri, yang menjadi Komandan Kodam Udayana/IX pada 1999, dinaikkan jabatannya menjadi Asisten Operasi Kepala Staf TNI pada November 1999 dan kemudian menangani operasi TNI di Aceh
- Kolonel Suhartono Suratman, yang menjadi Komandan Korem hampir sepanjang 1999, dinaikkan pangkatnya menjadi brigadir jenderal pada Agustus 1999 dan diangkat sebagai wakil kepala pusat informasi TNI
- Kolonel Mohammed Noer Muis, yang menggantikan Kolonel Suratman sebagai Komandan Korem pada Agustus 1999, kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi brigadir jenderal dan bertugas sebagai Wakil Gubernur Akademi Militer di Magelang
- Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, kepala Gugus Tugas Tribuana, kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi kolonel dan tetap bertugas di Kopassus.⁷⁰

Pangab TNI, Jenderal Wiranto, mengatakan dalam pengadilan Kapolres Timor-Leste pada 1999, Timbul Silaen, di pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia tentang Timor Timur di Jakarta, bahwa dia menilai bahwa perwira senior telah melakukan tugas dengan baik:

Saya mengevaluasi semua bawahan saya, Kapolres, Komandan Korem, dan melalui pengamatan saya dari laporan yang saya terima, karena mereka dipilih dari orang-orang yang terbaik di polisi dan tentara, mereka melaksanakan perintah yang saya rumuskan.⁷¹

Peran anggota polisi Indonesia

Komisi berkesimpulan bahwa sepanjang 1999, baik sebelum maupun sesudah Indonesia menandatangani Kesepakatan 5 Mei, polisi Indonesia tidak bisa mencegah tindak kekerasan yang dilakukan kelompok milisi, dan hanya dalam beberapa kasus mereka mengambil tindakan untuk menyelidiki atau menghukum tindakan seperti ini setelah terjadi. Meskipun ada ribuan pelanggaran yang dilakukan dalam periode ini, satu-satunya tindakan terhadap kelompok milisi tampaknya diambil sebagai tanggapan atas tekanan internasional, saat beberapa orang ditangkap dan didakwa atas serangan di markas UNAMET di Maliana pada 29 Juni dan atas konvoi kemanusiaan di Liquiçá pada 4 Juli, saat petugas PBB hadir di sana. Namun demikian, meskipun pelanggaran ini berat, para tertuduh hanya menerima hukuman singkat, yang kebanyakan ditangguhkan, dan pola umum diamnya polisi tidak berubah. Selain itu dalam beberapa kasus polisi terlibat aktif dalam pelanggaran yang dilakukan kelompok milisi dan anggota TNI. Unsur paramiliter khusus kepolisian, yaitu Brigade Mobil (Brimob), paling sering dilaporkan aktif terlibat sebagai pelaku pelanggaran.

Laporan tentang pelanggaran kepada Komisi menunjukkan bahwa sepanjang 1999 keterlibatan polisi dalam pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan serta penganiayaan mencapai tingkat tertinggi untuk periode 1974-

1999. Ini di samping fakta bahwa Kesepakatan 5 Mei secara khusus memberikan tanggung jawab kepada polisi untuk menjaga keamanan selama Jajak Pendapat.

Dalam pandangan Komisi tidak bertindaknya polisi bukan karena ketidakmampuan mereka mengontrol kekerasan, tetapi karena hubungan mereka yang di bawah TNI. Karena hubungan ini dan karena mengetahui bahwa milisi mendapat dukungan TNI, dan dalam beberapa kasus mereka ini adalah anggota TNI, polisi tidak mungkin melakukan campurtangan untuk mengontrol kegiatan mereka. Fakta bahwa ribuan petugas polisi semuanya mengabaikan tindak kejahatan berat dalam skala luas setiap harinya merupakan bukti kuat untuk percaya bahwa mereka diberi perintah untuk tidak menangkap anggota milisi atau TNI yang terlibat pelanggaran berat. Satu-satunya kesimpulan logis yang bisa ditarik dari penolakan sistematis untuk menjalankan tugas yang normal ialah bahwa polisi Indonesia terlibat baik secara terselubung maupun secara terbuka dalam kerjasama dengan TNI dalam suatu rencana untuk menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk memastikan hasil Jajak Pendapat yang diinginkan.

Meskipun polisi secara resmi dipisah dari ABRI pada 1 April 1999, pada kenyataannya TNI tetap mendominasi polisi. Mantan anggota polisi Indonesia mengatakan:

Saya melihat dia [Kapolres] sebagai perwira militer Indonesia seperti bupati dan Dandim. Saya katakan militer, sebenarnya Polri dipisah dari ABRI pada tanggal 1 April 1999, tetapi ini hanya bersifat administratif. Mengenai pekerjaan di lapangan tidak ada yang berubah setelah tanggal itu.⁷²

Kerjasama dan partisipasi pejabat pemerintah Indonesia di tingkat lokal maupun pusat

Pegawai pemerintah Indonesia baik di Timor-Leste dan di pusat terlibat dalam pelanggaran sistematis yang terjadi pada 1999 melalui berbagai cara. Di tingkat lokal, gubernur dan bawahannya mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan program ‘sosialisasi otonomi’, yang di samping tujuannya untuk meyakinkan penduduk untuk memilih integrasi, juga merupakan satu sumber pendanaan milisi. Sejumlah Bupati bekerja erat dengan kelompok milisi di kabupaten mereka, dan beberapa paling tidak didaftar sebagai “sponsor” kelompok ini dalam dokumen resmi. Banyak camat juga bertindak sebagai komandan milisi. Banyak saksi memberikan kesaksian kepada Komisi bahwa pegawai pemerintah diberitahu oleh pimpinan mereka bahwa mereka harus mendukung program pro-otonomi atau kehilangan pekerjaan mereka.

Menteri-menteri dari pusat memainkan berbagai peran selama periode seputar Jajak Pendapat. Beberapa peran ini bersifat marjinal dalam program pelanggaran yang dilakukan TNI dan sekutu milisinya.⁷³ Namun demikian, peran lainnya penting

* Menteri Luar Negeri, misalnya, dilaporkan menyediakan dana untuk mengirim sekelompok LSM In-

dalam strategi keseluruhan baik sebelum dan sesudah Jajak Pendapat. Contoh-contoh termasuk:

- Kehadiran Menteri Luar Negeri, Ali Alatas, dalam pertemuan di Denpasar, Bali pada April 1999 di mana peran milisi pada bulan-bulan selanjutnya dibicarakan
- Adanya peran yang dilaporkan sebagai signifikan dari Departemen Transmigrasi dan Permukiman, yang dipimpin oleh Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hendropriyono, yang bertugas beberapa kali di Timor-Leste sebagai perwira Kopassus, dalam perencanaan deportasi orang Timor ke Timor Barat setelah Jajak Pendapat.
- Keterlibatan Letnan Jenderal (purnawirawan) Faisal Tanjung, Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan, dalam menyusun strategi untuk memenangkan Jajak Pendapat, serta rencana darurat apabila strategi tersebut gagal.[†]

Tanggung jawab komando dalam TNI

Komisi berkesimpulan bahwa perwira senior TNI secara aktif ikut dalam mengorganisasi dan mengarahkan program pelanggaran massal. Selain itu bukti berlimpah bahwa para komandan ini bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tanggung jawab komando. Definisi tanggung jawab komando yang dipakai Komisi menyatakan bahwa orang dalam posisi berwenang—baik militer maupun sipil—yang memiliki kontrol langsung atas pelaku pelanggaran, dan yang tahu atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran, bertanggung jawab apabila mereka tidak mengambil langkah untuk mencegah atau menghukum pelaku pelanggaran.[†]

Komisi percaya bahwa mereka yang memegang jabatan senior di TNI tahu atau seharusnya mengetahui kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste. Informasi ini berasal dari hierarki TNI sendiri. Misalnya, Jenderal Wiranto memberikan bukti di pengadilan Kolonel Timbul Silaen di Jakarta bahwa dia (Wiranto) secara teratur menerima laporan tentang situasi di Timor-Leste dari berbagai sumber, termasuk Komandan Kodam Udayana/IX Mayor Jenderal Adam Damiri, Komandan Korem Timor Timur Kolonel Suhartono Suratman, dan Kapolwil Timbul Silaen.

Selain itu Jenderal Wiranto sendiri, serta orang lainnya, berulang-kali mengunjungi Timor-Leste sepanjang 1999. Dalam lima kunjungannya ke Timor-Leste Wiranto secara langsung diberi tahu oleh pejabat senior PBB, media, dan pemimpin Timor-Leste tentang tindak kekerasan yang dilakukan TNI dan kelompok milisi. Setelah

.....
donesia ke Timor-Leste untuk bertindak sebagai pengamat selama Jajak Pendapat. Divisi elektoral UN-AMET menolak memberi akreditasi kepada mereka dengan dasar bahwa mereka tidak netral.

* Fakta bahwa "Dokumen Garnadi" yang membicarakan persoalan strategis seperti ini (lihat catatan kaki di atas) ditujukan kepada Jenderal Faisal Tanjung sebagian memperjelas peran kunci Jenderal Feisal Tanjung.

† Tanggung jawab komando dibicarakan secara singkat dalam pendahuluan di Bagian ini dan lebih mendalam di Lampiran Bagian 2: Mandat Komisi.

kedatangan UNAMET pada Juni, Utusan Khusus Sekjen PBB, Ian Martin, memberi laporan berkala kepada pejabat Indonesia, dan pimpinan TNI secara khusus, yang mencakup informasi mengenai bukti tentang keterlibatan TNI dan hubungan TNI dengan kelompok milisi.⁷³ Dalam kesaksiannya di bawah sumpah dalam Audiensi Publik Nasional Komisi tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, dia mengatakan:

Saya dan teman-teman selalu memberikan informasi dan memberi tahu kekhawatiran kita kepada anggota sipil dan militer Gugus Tugas Indonesia. Kami sering bertemu dengan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang menurut Jenderal Wiranto adalah utusan pribadinya di lapangan. Polisi sipil dan penghubung militer kami melakukan hal yang sama, di Dili dan di distrik. Informasi dan protes diberikan secara langsung kepada penasihat Jenderal Wiranto dan Deplu oleh kantor UNAMET di Jakarta. Kalangan diplomatik yang mengamati situasi di Timor selalu diberi tahu. Setelah serangan di kantor UNAMET di Maliana dan terhadap konvoi kemanusiaan di Liquiçá, saya terbang ke Jakarta untuk menyerahkan bukti kami langsung kepada Jenderal Wiranto tentang hubungan TNI dan milisi, pada pertemuan tanggal 7 Juli. Kekhawatiran internasional saat itu mendorong Presiden Habibie untuk mengirim menterinya ke Dili, di mana saya dan teman-teman memberitahukan kekhawatiran kami kepada Menteri Luar Negeri Alatas.

Dewan Keamanan diberi informasi secara teratur berdasar laporan kami, dan Dewan Keamanan Indonesia melalui pernyataan ketuanya, dan melalui pertemuan ketuanya dan wakil Indonesia. Kekhawatiran Sekretaris Jenderal diberitahukan secara terus-menerus di berbagai tingkat, oleh utusan pribadinya, Duta Besar Jamsheed Marker, dan oleh pejabat senior. Negara-negara utama, termasuk Amerika Serikat dan Australia, diberitahu di New York, di Jakarta, dan ketika anggota senior pemerintah mereka mengunjungi Timor-Leste. Saya tidak tahu semua perincian mengenai tekanan yang diberikan oleh setiap pemerintah kepada Indonesia, tetapi ada banyak tekanan.

Peran penting Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim

Dari Mei 1999 Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim secara resmi menjadi anggota Gugus Tugas untuk mengawasi Jajak Pendapat di Timor-Leste dan dari Juli 1999 dia menjadi kepala Tim Khusus/Ajudan Umum Gugus Tugas. Namun demikian Komisi berkesimpulan bahwa dalam kapasitas resmi Makarim terlibat dalam mengorganisasi dan mengarahkan kelompok milisi Timor paling tidak dari Maret 1999 dan kemungkinan lebih awal lagi.

Pernyataan mantan pemimpin pro-otonomi kepada Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat mengindikasikan bahwa Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan

Darat, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, mengatakan kepada pemimpin pro-otonomi Timor pada Maret 1999 bahwa Makarim adalah orang yang akan bertanggung jawab mengorganisasi kegiatan-kegiatan sebelum Jajak Pendapat.

Pernyataan mantan pemimpin pro-otonomi kepada Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat juga menunjukkan bahwa Makarim bertanggung jawab dalam mengorganisasi pasokan senjata termasuk senjata otomatis kepada kelompok milisi, melalui Kolonel Suhartono Suratman, yang menjadi Komandan Korem di Timor Timur sampai 13 Agustus 1999.

Temuan dan Kesimpulan:

Komisi memperoleh temuan berikut:

1. Perwira senior TNI membentuk kelompok milisi, memberi mereka jaminan bahwa mereka akan didanai, dipersenjatai, dan didukung oleh TNI, dan memberitahu mereka bahwa mereka akan dipakai melawan pendukung prokemerdekaan.
2. Perwira senior TNI secara terbuka mendukung kelompok milisi dalam pertemuan akbar serta pertemuan-pertemuan terbuka lain.
3. Personel TNI bertugas dalam kelompok-kelompok milisi ini. Beberapa kelompok milisi dipimpin oleh personel TNI
4. TNI mendanai milisi. Dana pemerintah juga dialihkan untuk membayar anggota milisi. Pembayaran yang secara teratur diberikan kepada ribuan anggota milisi memerlukan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi, yang melibatkan baik pejabat militer dan sipil
5. TNI mempersenjatai milisi, dan bisa menggalang senjata secara mudah.
6. TNI melatih milisi, di basis-basis resmi TNI dan lokasi lain.
7. TNI membiarkan kelompok milisi menggunakan markas militer sebagai basis mereka, termasuk sebelum dan sesudah pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran yang melibatkan pembunuhan penduduk sipil.
8. Anggota TNI sering melakukan pelanggaran bersama anggota milisi sebagai bagian kerjasama.
9. TNI bisa mengatur insiden kekerasan semau mereka, termasuk tindakan milisi.
10. Dengan sedikit perkecualian TNI tidak melakukan tindakan terhadap anggota milisi yang melakukan pelanggaran, meskipun umum diketahui bahwa milisi membawa senjata secara terbuka, dan membunuh, menyiksa, serta menganiaya penduduk sipil di depan personel TNI.

11. Personel senior TNI mengeluarkan ancaman dan peringatan bahwa kekerasan dan penghancuran harta benda secara massal akan terjadi setelah Jajak Pendapat, apabila pilihan merdeka menang. Kekerasan dan penghancuran benar-benar terjadi setelah Jajak Pendapat, sesuai peringatan.
12. Pejabat senior pemerintah Indonesia disarankan membuat rencana darurat yang meliputi evakuasi massal dan penghancuran fasilitas dan aset utama, enam minggu sebelum tindakan ini dilakukan oleh TNI dan milisi.
13. Tingkat kekerasan dan penghancuran meningkat tajam setelah TNI diberi wewenang luas atas perkembangan di Timor-Leste, setelah pengumuman keadaan darurat pada 7 September 1999.
14. Anggota TNI, polisi, dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam pelanggaran tidak ditangkap atau dikenakan tindakan disiplin atas peran mereka sebagai pelaku.
15. Hampir tidak ada tindakan dilakukan untuk menghentikan pelanggaran, meskipun telah ada permintaan dari PBB dan negara-negara lain, dan kapasitas yang jelas-jelas ada untuk mematahkan resistansi milisi karena jumlah persenjataan dan personel yang jauh lebih besar dari TNI dan polisi
16. Sejumlah perwira senior TNI yang memegang jabatan komando atas pasukan di Timor-Leste pada saat pelanggaran terjadi justru diberi penghargaan berupa promosi jabatan atas tindakan mereka di Timor-Leste, meskipun pasukan yang mereka bawahi terlibat dalam pelanggaran massal dan tidak memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan keamanan di wilayah ini.

Kesimpulan:

Komisi berkesimpulan bahwa anggota senior pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan program yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan berskala luas terhadap penduduk sipil Timor, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para komandan senior ini memikul tanggung jawab langsung maupun tanggung jawab komando atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi.

Komisi berkesimpulan bahwa tujuan awal rencana yang diterapkan ialah untuk memastikan bahwa mayoritas penduduk Timor-Leste memilih tetap sebagai bagian dari Indonesia dalam Jajak Pendapat Agustus 1999. Bagian integral dari rencana untuk mencapai tujuan ini ialah dengan menggunakan kelompok milisi Timor sebagai suruhan TNI, dalam upaya untuk mengelak tuduhan mengenai tanggung jawab TNI. TNI secara kelembagaan bertanggung jawab dalam membentuk, mempersenjatai, mendanai, mengarahkan tindakan kelompok milisi. Selain itu banyak pelanggaran dilakukan oleh anggota aktif TNI, baik sendiri maupun dengan kelompok milisi. Anggota polisi Indonesia dan pegawai pemerintah sipil juga terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindak pelanggaran secara sistematis. TNI, polisi, dan pemerintah Indonesia semua terlibat dalam melindungi pelaku dari tanggung jawab atas tindakan mereka.

Lampiran 2: Tanggung jawab komando

Tabel 1: Tanggung jawab komando terhadap keterlibatan institusi dalam pelanggaran hak asasi manusia, Timor-Leste 1974 – 1999

| Institusi | Kategori Pelanggaran | | | | | | | Total |
|-----------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|---------------------|------------------|-------|
| | Pembunuhan warga sipil | Penahanan | Penghilangan | Penyiksaan | Penganiayaan | Pelanggaran Seksual | Pelanggaran lain | |
| Kodam | 2 | 23 | 0 | 14 | 6 | 0 | 3 | 48 |
| Korem | 4 | 245 | 3 | 43 | 57 | 1 | 122 | 475 |
| Kodim (Total) | 129 | 3,321 | 74 | 1,198 | 725 | 40 | 1,213 | 6,700 |
| Kodim 1627 – Dili | 16 | 302 | 8 | 104 | 53 | 0 | 56 | 539 |
| Kodim 1629 – Lautém | 20 | 564 | 22 | 92 | 113 | 1 | 180 | 992 |
| Kodim 1631 – Manatuto | 4 | 285 | 4 | 146 | 41 | 1 | 93 | 574 |
| Kodim 1632 – Aileu | 2 | 202 | 3 | 70 | 70 | 2 | 64 | 413 |
| Kodim 1633 – Ainaro | 5 | 241 | 0 | 82 | 27 | 9 | 103 | 467 |
| Kodim 1634 – Same | 14 | 296 | 9 | 126 | 69 | 2 | 81 | 597 |
| Kodim 1637 – Ermera | 11 | 167 | 6 | 101 | 57 | 15 | 78 | 435 |
| Kodim 1638 – Liquicá | 3 | 159 | 1 | 72 | 37 | 3 | 30 | 305 |
| KORAMIL | 192 | 3,840 | 56 | 1,047 | 724 | 90 | 1,655 | 7,604 |
| Yonif 744 | 100 | 229 | 12 | 78 | 76 | 4 | 185 | 684 |
| Yonif 745 | 178 | 328 | 30 | 157 | 91 | 17 | 273 | 1,074 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Pertahanan Sipil | 635 | 4,510 | 128 | 1,615 | 1,264 | 124 | 2,550 | 10,826 |
| Hansip | 563 | 3,571 | 110 | 1,193 | 827 | 105 | 2,074 | 8,443 |
| Yonif Satuan Tempur (Total) | 437 | 2,166 | 120 | 771 | 608 | 96 | 2,162 | 6,360 |
| Yonif 144 | 4 | 55 | 0 | 43 | 38 | 0 | 0 | 140 |
| Yonif 301 | 2 | 28 | 14 | 12 | 2 | 8 | 0 | 66 |
| Yonif 315 | 17 | 205 | 4 | 82 | 17 | 7 | 85 | 417 |
| Yonif 321 | 12 | 35 | 12 | 7 | 7 | 13 | 0 | 86 |
| Yonif 403 | 22 | 47 | 2 | 2 | 5 | 93 | 0 | 171 |
| Yonif 407 | 12 | 60 | 1 | 12 | 19 | 2 | 21 | 127 |
| Yonif 512 | 18 | 91 | 3 | 31 | 9 | 7 | 119 | 278 |
| Yonif 514 | 0 | 22 | 0 | 6 | 2 | 0 | 41 | 71 |
| Yonif 641 | 8 | 87 | 3 | 12 | 24 | 9 | 13 | 156 |
| SGI | 80 | 1,118 | 12 | 705 | 337 | 20 | 409 | 2,681 |
| Kopassus | 169 | 2,774 | 74 | 1,348 | 680 | 100 | 1,085 | 6,230 |
| Nanggala | 68 | 1,249 | 40 | 546 | 224 | 39 | 338 | 2,504 |
| Rajawali | 19 | 282 | 2 | 255 | 129 | 16 | 178 | 881 |
| Milsas | 19 | 309 | 7 | 229 | 233 | 2 | 228 | 1027 |
| Polisi | 168 | 2,068 | 19 | 734 | 588 | 46 | 884 | 4,507 |
| Polres | 9 | 530 | 1 | 168 | 117 | 12 | 130 | 967 |
| Polsek | 51 | 379 | 1 | 116 | 74 | 7 | 116 | 744 |
| Pemerintah | 217 | 2,739 | 63 | 743 | 664 | 54 | 2,110 | 6,590 |
| Pemerintah provinsi | 4 | 105 | 6 | 26 | 23 | 105 | 0 | 269 |
| Pemerintah kabupaten | 14 | 162 | 4 | 47 | 51 | 10 | 72 | 360 |
| Pemerintah desa | 41 | 821 | 19 | 208 | 117 | 13 | 355 | 1574 |
| Marinir | 24 | 67 | 3 | 7 | 10 | 3 | 42 | 156 |
| Brimob | 10 | 249 | 5 | 106 | 82 | 4 | 76 | 532 |
| Total | 3.303 | 33.931 | 881 | 12.354 | 8.297 | 1.080 | 17.224 | 77.070 |

Unit-unit Teritorial Kodam XVI/Udayana (1974 - 79)/ Kodim IX Udayana

Tabel 2: Para Komandan Kodam XVI/Udayana / Kodim IX Udayana

| Nama | Pangkat | Masa Tugas | Posisi |
|-----------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|
| Ign. Pranoto Koesoemo | Brigjen | 16/02/1974 - 03/03/1976 | Komandan |
| Soeweno | Brigjen | 3/03/1976 - 14/10/1978 | Komandan |
| Dading Kalbuadi | Brigjen | 14/10/1978 - 18/05/1983 | Komandan |
| Try Sutrisno | Kolonel | 1978-04/05/1979 | Kepala Staf |
| Theo Syafei | Brigjen | 1980-82 | Wakil Asisten Operasi |
| Yunus Yosfiah | Brigjen | ?-1985 | Asisten Operasi |
| R. P. Damianus Soetarto | Mayjen | 18/05/1983 -06/03/1986 | Komandan |
| Adolf Sahala Radjaguguk | Mayjen | 06/03/1986-12/08/1987 | Komandan |
| Wismoyo | Mayjen | 1985-1987 | Kepala Staf |
| Djoko Pramono | Mayjen | 12/08/1987-12/08/1988 | Komandan |
| Sintong Panjaitan | Mayjen | 12/08/1988-13/01/1992 | Komandan |
| Moh. Ma'ruf | Brigjen | 01/07/1989-13/05/1990 | Kepala Staf |
| Dahlan Effendi | Brigjen | 13/05/1990-05/09/1992 | Kepala Staf |
| HBL Mantiri | Mayjen | 13/01/1992-13/08/1992 | Komandan |
| Soewardi | Mayjen | 13/08/1992-31/03/1993 | Komandan |
| Theo Syafei | Mayjen | 31/03/1993-08/02/1994 | Komandan |
| Adang Ruchiatna Purwadirdja | Mayjen | 08/02/1994-11/09/1995 | Komandan |
| Abdul Rivai | Mayjen | 11/09/1995-24/07/1997 | Komandan |
| Syahrir M S | Brigjen | 01/02/1995-07/1997 | Kepala Staf |
| Syahrir M S | Mayjen | 24/07/1997 - 05/1998 | |
| Yudomo Sastrosuhardjo | Mayjen | 27/05/1998 - 04/06/1998 | |
| Adam Damiri | Mayjen | 16/06/1998 - 04/11/1999 | |
| Mahidin Simbolon | Brigjen | 25/06/1998 - 01/11/2000 | |

Korem

Jumlah pelanggaran terbesar dilakukan oleh Korem pada 1980 – 1984, ketika 77% dari semua pelanggaran yang dilaporkan (367/475) terjadi, dengan jumlah tertinggi terjadi pada 1982 (179/475). 80% dari semua pelanggaran yang dihubungkan dengan Korem dilaporkan terjadi di Distrik Dili (375/475), tetapi ada juga tahun-tahun tertentu saat pelanggaran juga dilaporkan terjadi di distrik-distrik lain: Distrik Baucau pada 1983 (16/475), Manatuto pada 1995 (22/475), dan Oecussi pada 1999 (16/475).

Tabel 3: Komandan-komandan Korem yang diketahui

| Nama | Pangkat | Masa Tugas | Posisi |
|-------------------------|---------|-------------------------|--|
| Adolf Sahala Radjaguguk | Kolonel | 26/03/1979 - 1982 | Komandan |
| Willem T da Costa | Mayjen | 1981 – 1982 | Kepala Seksi 5/Teritorial; |
| Iswanto | Mayjen | 1979 – 1980 | Kepala Seksi / Intelijen |
| A P Kalangi | Kolonel | 1982? – 1983? | |
| Purwanto | Kolonel | 1983 - August 1983 | Komandan |
| Rudjito (Rudito) | Kolonel | August 1983 –1984 | Komandan |
| Rahardjo | Kolonel | 1984 - 1984/5? | Komandan |
| Yunus Yosfiah | Kolonel | 1984/5 – 1987 | Komandan |
| Moh. Ma'ruf | Kolonel | 1987 - 29/4/89 | Komandan |
| Rudolf Warouw | Kolonel | 29/4/89 - 13/5/90 | Komandan |
| Ketut Wardhana | Brigjen | 13/05/1990 - 13/05/1991 | |
| J P Sepang | Kolonel | 13/5/91 - 7/1/92 | Komandan |
| Cherry Bolang | Letkol | 1991 - 14/02/1992 | Kepala Staf |
| Alexander | Mayor | 1992 – 1993 | Kepala Seksi 1/ Intelijen |
| Dunidja | Kolonel | 7/1/92 - 15/3/93 | Komandan |
| Armyn Ali A | Mayor | 1992 – 1993 | Kepala Seksi 3/ Personel |
| Hari Mulyono | Mayor | 1992 – 1993 | Kepala Seksi 2/ Operasi |
| Mufad Santoso | Letkol | 1992 – 1993 | Kepala Seksi 4/ Logistik |
| Sukiman Kadir | Letkol | 1992 – 1993 | Kepala Seksi 5/Teritorial |
| H Tambunan | Letkol | 1992 – 1993 | |
| Suntoro | Kolonel | 15/3/93 - 20/7/93 | Komandan |
| Johny Lumintang | Brigjen | 20/7/93 - 5/9/94 | Komandan |
| Kiki Syahnakri | Kolonel | 5/9/94 - 27/5/95 | Komandan |
| George Toisutta | Kolonel | 08/1995 – 1996 | Komandan |
| Daud Napis | Letkol | 03/1995 – 1996 | Kepala Seksi 1/Intelijen |
| Darmawi Chaidir | Letkol | 03/1995 - 07/1997 | Kasrem |
| Mahidin Simbolon | Kolonel | Juli 1995 - 31/5/97 | Komandan |
| Paulus Gatot Rudianto | Letkol | 1996 - 06/1998 | Kepala Seksi 1/Intelijen |
| Dharma Silen | Letkol | 1996 – 1997 | Kepala Seksi 3/Personel |
| Suwarno | Letkol | 08/1997 – 1998 | Kasrem |
| Simon G. Sigar | Letkol | 25/11/1997 - 04/06/1998 | Kepala Seksi 2/Operasi; Komandan Batalion 745 |
| Salamat Sidabutar | Kolonel | 31/5/97 - 4/6/98 | Komandan |
| Soekotjo Hadi | Kolonel | 1996 - 06/1997 | Komandan |

| | | | |
|------------------------|---------|----------------------|--------------------------|
| Suryo Prabowo | | 06/1997 - 13/06/1998 | Komandan |
| Haing Tjipto Sularsono | Mayor | 1997 - 1999 | Kepala Seksi 3/Personel |
| Gultom | Letkol | 1997 - 1999 | Kepala Seksi 4/Logistik |
| FX Suhartono Suratman | Kolonel | 10/6/98 - 13/8/99 | Komandan |
| Mudjiono | Kolonel | 13/06/1998 - 05/1999 | Komandan |
| Nanang Priadi | Kolonel | Juni 1999 - ? | |
| Mohammad Noor Muis | Kolonel | 13/8/99 - 30/3/00 | Komandan Regional |
| Hardiono Saroso | Letkol | 1999 | Kepala Staf |
| Supadi | Letkol | 1999 | Kepala Staf |
| Bambang Wisnumurthy | Mayor | 1999 | Kepala Seksi 1/Intelijen |

Komandan Operasi

| Komando Operasi | Komandan | Tahun tugas |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| Bakin | Letjen Ali Murtopo | ? |
| Departemen Pertahanan dan Keamanan | Kolonel Dading Kalbuadi | ? |
| Komando Tugas Gabungan (Kogasgab) | Brigjen Soeweno | x/10/75 - 3/3/76 |
| Komando Daerah Pertahanan Keamanan (Kodahankam) | Kolonel Dading Kalbuadi | 3/3/76 - 14/10/78? |
| Komando Operasi Keamanan (Koopskam) | Brigjen Damianus Sutarto | ? - sekitar 18/5/83 |
| | Brigjen Sugito | Sekitar 18/5/83 - sekitar 9/8/85 |
| | Brigjen Warsito | Sekitar 9/8/85 - sekitar 15/1/87 |
| | Brigjen Mantiri | Sekitar 15/1/87 - Agustus 1988 |
| | Brigjen Mulyadi | Agustus 1988 - Mei 1990 |
| | Brigjen Warouw | Mei 1990 - Jan. 1992 |
| Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) | Brigjen Theo Syafei | Jan. 1992 - Maret 1993 |

Kodim – secara umum

Data berikut ini berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para personel yang bertugas di 13 Komando Distrik Militer (Kodim) antara 1974 dan 1999. Tabel 4 menunjukkan perincian pelanggaran oleh para anggota Kodim menurut jenis pelanggaran, dengan sejumlah besar pelanggaran adalah penahanan dan penyiksaan, dan penganiayaan sering berkaitan dengan penahanan.

Tabel 4: Perincian pelanggaran Kodim menurut jenis pelanggaran

| Jenis pelanggaran | Jumlah | % |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Penahanan | 3,321 | 55.0 |
| Penyiksaan | 1,198 | 19.9 |
| Penganiayaan | 725 | 12.0 |
| Pemindahan | 545 | 9.0 |
| Pembunuhan warga sipil | 129 | 2.1 |
| Penghilangan | 75 | 1.2 |
| Pelanggaran berbasis-seksual | 40 | 0.7 |
| Total | 6,033 | 100.0 |

Jumlah terbesar pelanggaran dilakukan oleh Kodim sebagai kesatuan terjadi dalam periode 1981-83 (41% atau 2,462/6,033) dan pada 1999 (9% atau 561/6,033).

Kodim 1627 Dili

Pelanggaran

Kodim Dili melakukan jumlah terbesar pelanggaran dalam dua periode: pada 1980-84 (331/512) dan dalam jumlah yang lebih kecil pada 1990-94 (100/512).

Tabel 5: Komandan-komandan Kodim 1627 Dili yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun tugas | Posisi |
|---------------------|---------|-----------------------|---------------------------|
| Abdul Rivai | Letkol | 08/1981-? | Komandan |
| Suroto | Letnan | 1980-1983 | Kepala Seksi 1/ Intelijen |
| M.K. Sirait | Letkol | 07/1989-24/07/1990 | |
| Sjarifuddin Zein | Letkol | 06/01/1992-04/1993 | |
| Soekotjo Hadi | Letkol | 1994-27/09/1995 | Komandan |
| Didit Satrio | Letkol | 27/09/1995-02/08/1996 | |
| Endar Priyanto | Letkol | 25/11/1997-09/08/1999 | Komandan Distrik |
| Hartono | Kapten | 1998-1999 | Kepala Seksi 2/ Operasi |
| Sujarwo [Soedjarwo] | Letkol | 08/1999 - | Komandan |
| Endar Priyanto | Letkol | 1999 | Komandan |

Kodim 1629 Lautém

Pelanggaran

Hampir 93% pelanggaran yang dilakukan oleh Kodim Lautém terjadi pada periode 1978-86 (849/916), dalam tiga fase khusus. Proporsi pelanggaran yang lebih sedikit terjadi pada 1978-80 (86/916) dan 1984-86 (113/916), bila dibandingkan dengan periode tiga tahun di tengah 1981 – 1983 (650/916), saat terjadi jumlah terbesar pelanggaran yang dilaporkan dilakukan oleh Kodim. Kemudian jumlah pelanggaran dilaporkan menurun tajam, meskipun pada 1992 (11/916) dan 1999 (26/916) lebih daripada yang normal selama tahun-tahun itu. Walaupun ada kejadian penyiksaan dalam banyak tahun, sejauh ini jumlah terbesar penyiksaan terjadi pada 1983 (57/92). Hampir semua penghilangan dilaporkan terjadi selama 1981-82 (98/105).

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Posisi |
|-------------------|-------------|-----------------------|----------|
| Henricus Harjatmo | Letkol | 1979-1980 | |
| Emmanuel Messu | Letnan Satu | 1979-1980 | |
| Hidayat | Letkol | 03/1985-1987 | |
| Paul St. L. Detaq | Letkol | ?-12/01/1991 | Komandan |
| Subandi | Letkol | 12/01/1991-01/1992 | |
| Pandu Wibowo | Letkol | 06/08/1996-25/11/1997 | Komandan |
| Sudradjat A. S. | Letkol | 10/1998-1999 | Komandan |

Kodim 1631 Manatuto

Pelanggaran

Sebagian besar pelanggaran yang dilaporkan dilakukan oleh Kodim Manatuto Kodim terjadi pada periode 1980-82 (73% atau 384/530) dengan jumlah terbesar terjadi pada 1982 (285/530). Tidak seperti biasanya, tidak terjadi peningkatan pada 1999. Jumlah terbesar peristiwa penyiksaan terjadi pada tahun 1982 (130/146).

Tabel 6: Para Komandan Kodim 1631 Manatuto yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Posisi |
|-----------------------|---------|-------------------------|----------|
| Frits Binanggal | Letkol | 1987 – 17/07/1990 | Komandan |
| Ansori Deas | Letkol | 17/07/1990 – 28/02/1992 | |
| Muhamad Kadir | Letkol | 08/05/1993 – ? | Komandan |
| Bambang Gandhi Baroto | Letkol | 10/1995 – 29/07/1996 | |
| Daud Napis | Letkol | 29/07/1996 – 25/11/1997 | |
| Sulastiyo | Letkol | 25/11/1997 – 08/08/1999 | Komandan |
| Gerson Ponto | Letkol | 1999 | Komandan |
| Sulastiyo | Letkol | 1999 | Komandan |

Kodim 1632 Aileu

Pelanggaran

Jumlah terbesar pelanggaran yang terjadi pada 1983 (113/368). Tahun-tahun lain dengan jumlah pelanggaran yang lebih tinggi daripada biasanya antara lain adalah 1978 (23/368), 1980 (60/368), 1981 (30/368), 1984 (45/368), dan 1998 (22/368).

Tabel 7: Para Komandan Kodim 1632 Aileu yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Posisi |
|-------------------|---------|-------------------------|----------------|
| Rochadi | Letkol | 1989 – 22/08/1992 | |
| M Mansyur | Letkol | 1992 – 1993 | |
| Artawi Sahari | Letkol | 22/08/1992 – 08/03/1995 | |
| Maman Rachman | Mayor | 01/1993 – 06/1996 | Wakil Komandan |
| Budi Atmono | Letkol | 08/03/1995 – 10/1995 | |
| A A Gede Suardana | Letkol | 10/1995 – 01/08/1996 | |
| Marciano Norman | Letkol | 10/1995 – 01/08/1996 | |
| Soewarno | Letkol | 01/08/1996 – 05/08/1997 | |
| Hardiono Saroso | Letkol | Awal 1999 | Komandan |
| Maman Rahman | Mayor | 1999 | Komandan |

Kodim 1633 Ainaro

Pelanggaran

Jumlah terbesar pelanggaran yang dilaporkan dilakukan oleh Kodim Ainaro, yaitu di atas 60%, dilakukan pada 1982 (255/416), melewati suatu peningkatan perlahan yang dilaporkan selama tahun 1976-81 (115/416 secara keseluruhan). Setelah tidak ada pelanggaran yang tercatat pada 1983, pelanggaran-pelanggaran tersebut meningkat lagi pada 1984 (25/416).

Peristiwa pelanggaran seksual yang dilaporkan dilakukan Kodim Ainaro sedikit lebih tinggi (9/416) dibanding Kodim lainnya, meskipun persentasinya dari semua pelanggaran menunjukkan proporsi yang kecil (sekitar 2%). Kesembilan pelanggaran seksual yang dilaporkan, terjadi pada periode 1980-82.

Tabel 8: Komandan-komandan Kodim 1633 Ainaro yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Posisi |
|---------------|---------|-------------|--------|
| Hari Saryono | Mayor | 1977 – 1978 | |
| Yusup | Mayor | 1979 – 1980 | |
| Sjamsul Rizal | | 1980 – 1981 | |
| Mursiono | | 1981 – 1982 | |

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|----------|
| Harkito | | 1982 – 1983 | |
| Suryadi | Letkol | 16/06/1989 – 28/07/1990 | |
| Achmad Yahya | Letkol | ? – 14/02/1992 | Komandan |
| Paulus Gatot Rudianto | Letkol | September 1998-99 | Komandan |

Kodim 1634 Manufahi

Pelanggaran

Jumlah tertinggi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Kodim Manufahi terjadi pada 1982 (142/542) di mana periode 1979-85 mencakup hampir tiga perempat (74.3%) dari seluruh pelanggaran (403/542). Juga ada jumlah peristiwa pelanggaran yang tinggi pada 1994 (69/542) dan relatif tinggi pada 1998 (25/542) dan 1999 (15/542). Hampir semua penghilangan (8/9) dan pembunuhan warga sipil (7/15) terjadi pada 1983. Setengah dari peristiwa penyiksaan terjadi pada 1980 - 82 (63/126) dengan sejumlah besar terjadi pada 1994 (34/126).

Tabel 9: Komandan-komandan Kodim 1634 Manufahi yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Posisi |
|------------------------|---------|-------------------------|----------|
| Bambang R. Gunadi | Letkol | 1985 – 1986 | |
| Herman S. | Letkol | 1986 – 1988 | |
| Syahrial B. P. Peliung | Letkol | ? - 06/1989 | |
| Sjarifuddin Zein | Letkol | 1988 - 1991 | |
| Suprpto Tarman | Letkol | 1991 - 1993 | |
| Jongko Sibarani | Letkol | 1993 - 03/1995 | |
| Ngadiman Sumarto Putro | Letkol | 23/05/1995 - 10/1995 | |
| Tony Suhartono | Letkol | 10/1995 - 01/08/1996 | |
| Endang Nirwan | Letkol | 01/08/1996 - 25/11/1997 | |
| Suwondo | Letkol | 25/11/1997 -99 | |
| Drs. HM Sinaga | Mayor | 1999 | Komandan |

Kodim 1637 Ermera

Pelanggaran

Pola pelanggaran yang dilaporkan di Kodim Ermera berbeda dalam banyak hal dari pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan di distrik-distrik lain. Pertama, laporan-laporan itu sebagian besar berasal dari periode awal dan periode akhir konflik, dan hampir tidak ada pelanggaran yang dilaporkan pada 1980-an. Kedua,

ada tingkat pelanggaran seksual yang sangat tinggi yang dilakukan oleh Kodim Ermera, sebagaimana dibahas di bawah ini. Lebih dari sepertiga pelanggaran yang dilaporkan (138/378) terjadi pada 1976-78 dengan 1976 sebagai tahun dengan pelanggaran tertinggi (84/378). Namun, pada 1981-83 ketika hampir semua Kodim yang lainnya melakukan tingkat pelanggaran yang tinggi, jumlah laporan dari Ermera justru rendah (4/378) dan hanya delapan laporan pelanggaran (8/378) selama keseluruhan periode 1981-90. Sebaliknya antara 1991 dan 1998 terjadi banyak pelanggaran dilaporkan (128/378) dan pelanggaran mencapai puncak tertinggi dari keseluruhan periode pada 1999 (104/378). Tingkatan laporan pelanggaran seksual di Ermera (15/378) adalah lima kali lebih tinggi dari pada angka rata-rata di setiap Kodim. Hampir semuanya (12/15) dilaporkan dilakukan pada periode 1976-78. Sisanya (3/15) terjadi pada 1999.

Tabel 10: Komandan-komandan Kodim 1637 Ermera yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Posisi |
|--------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| Darsono | ? | Ada 1976 | Kepala Seksi 1/ Intelijen |
| Moustan | Mayor | Ada 1976 | |
| Ripomo | Letkol | Ada 1976 | |
| Mustafa | Mayor | Ada 1978 | |
| Supadi | Letkol | 1/8/1978 | Komandan Kodim |
| Istiyono | Mayor | Ada 1979 | |
| Sakan Tampubolon | Mayor | Ada 1995 | |
| Partidjo | Letkol | 10/1995 - 01/08/1996 | |
| Syarid A. R. | Kapten | Ada 1999 | |
| I Ketut Suarna | Kapten | Ada 1999 | |
| Hery Mutholib | Letnan Dua | Ada 1999 | |
| T. Beny Firmansyah | Mayor | Ada 1999 | |
| Muhamad Nur | Letkol | Ada 1999 | Komandan Kodim |

Kodim 1638 Liquiçá

Pelanggaran

Hampir setengah dari pelanggaran dilaporkan dilakukan oleh Kodim Liquiçá terjadi dalam periode 1979-82 (142/279). Tidak ada laporan dari 1983, tetapi ada 15 pada 1984. Dalam tahun-tahun selanjutnya terdapat sedikit pelanggaran dilaporkan sampai 1995-99 (108/297).

Tabel 11: Komandan-komandan Kodim 1638 Liquiçá yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Posisi |
|-----------------|---------|----------------------|---------------------------|
| Purwanto | | Ada 1991 | Kepala Seksi 1/ Intelijen |
| Hotman Sibarani | Letkol | 18/08/1995 - 06/1996 | Komandan |
| Sumartono | Mayor | Ada 1995 | |
| Antonio Andrade | Kapten | Ada 1996 | |
| Bedjo Juwono | Kapten | Ada 1996 | |
| Suradal Muhajir | Letkol | 06/1996 - 25/11/1997 | Komandan Kodim |
| Asep Kuswadi | Letkol | 25/11/1997 - 1999 | Komandan Kodim |
| Asep Kuswadi | Letkol | 1999 | Komandan Kodim Liquiçá |

Koramil

Komisi menerima suatu jumlah laporan yang besar yaitu 7,486 secara total, dari pelanggaran yang melibatkan ke-65 Komando Rayon Militer (Koramil) dari seluruh periode konflik dan di seluruh distrik. Lebih dari setengah pelanggaran yang dilaporkan, terjadi dalam periode 1978-84 (3,864/7,486). Sekitar 17.4% dari pelanggaran-pelanggaran ini dilaporkan dilakukan pada tahun 1999 (1,301/7,486).

Walaupun ada laporan tentang pelanggaran di setiap distrik, jumlah pelanggaran tertinggi adalah di Distrik Dili (1,381/7,486, di atas 18%). Semua pelanggaran yang dilaporkan di Distrik Oecussi adalah dari tahun 1999 (293/299)

Batalion Infanteri

Batalion Infanteri 744

Pelanggaran

Terdapat total 675 kejadian pelanggaran oleh Batalion 744 yang dilaporkan kepada CAVR. Hampir 62% dari kejadian-kejadian ini (415/675) berkaitan dengan tahun-tahun 1978 (114/675), 1980 (96/675), 1998 (153/675), dan 1999 (52/675). Batalion 744 adalah sebuah unit teritorial yang secara permanen ditempatkan di Timor-Leste dan aktif di semua distrik. Secara umum ada periode panjang di berbagai distrik di mana hanya sedikit atau bahkan tidak ada pelanggaran yang dilaporkan, diselingi dengan periode-periode aktivitas yang signifikan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

- Distrik Dili mencakup sepertiga dari semua pelanggaran (215/675), khususnya pada 1980 (82/215) dan 1998 (44/215)
- Distrik Manufahi juga dilaporkan memiliki sejumlah besar kejadian (154/675), di mana hampir semuanya berhubungan dengan 1998 (129/154), kemungkinan berhubungan dengan kejadian Alas (sama dengan Batalion 745 di bawah)

- Di Distrik Ermera (117/675) hampir semua laporan berhubungan dengan 1978 (87/117). Tidak ada laporan dari periode 1979 – 95, diikuti dengan sebuah peningkatan pada 1996/97 (23/117) dan tidak ada lagi setelahnya.
- Pelanggaran di Distrik Bobonaro (48/675) juga hampir semuanya terjadi dalam periode 1975 – 79 (33/48) dan 1997 (12/48), dengan hanya satu laporan dari periode intervensi, 1980 – 96.

Tabel 12: Komandan-komandan Batalion 744 yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Posisi |
|--------------------------|---------|-------------------------|----------------|
| Untung Setiawan | | 1977 – 1981 | Komandan Kompi |
| Yunus Yosfiah | Mayor | 24/01/1978 – 1979 | Komandan |
| Abdul Rivai | Letkol | 1979 – 08/1981 | Komandan |
| Gerhan Lentara | | 1980 – 1981 | Komandan Kompi |
| Gunawan | | 1982 – 1983 | Komandan Kompi |
| Bambang Wiriadi | | 1984 – 1985 | Komandan Kompi |
| Hendrik Tingangin | | 1985 – 1989 | Komandan Kompi |
| Susilo Bambang Yudhoyono | Letkol | 1986 – 1988 | Komandan |
| Mk Sirait | Letkol | 1988 – 06/1989 | |
| Syahrial Bp Peliung | Mayor | 1990 – 1991 | |
| Adi Mulyono | Mayor | 18/03/1995 – 24/07/1995 | Komandan |
| Endar Priyanto | Mayor | 24/07/1995 – 02/08/1996 | Komandan |
| Achmad Mas Agus | Mayor | 02/08/1996 – 27/08/1998 | Komandan |
| Heri Subagio | | 1996 – 1998 | Komandan Kompi |
| Yakraman Yagus | Mayor | 27/08/1998 – ? | Komandan |

Batalion Infanteri 745

Pelanggaran

Komisi menerima 1,073 laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh Batalion 745 antara 1974 dan 1999. Lebih dari 57% pelanggaran terjadi antara 1978 dan 1980 dengan hampir 35% terjadi hanya pada 1979. 23% pelanggaran lebih lanjut terjadi 1981-83, dibandingkan dengan hanya sekitar 7% pada 1998-99. Untuk setiap tahun mulai dari 1984- 95 jumlah laporan adalah sepuluh atau kurang dari sepuluh setiap tahunnya. Batalion 745 adalah sebuah unit teritorial yang secara permanen ditempatkan di Timor-Leste dan aktif di hampir semua distrik. Namun jumlah pelanggaran dilaporkan yang terbesar diterima dari distrik-distrik berikut ini:

- Lautém: sekitar 29% dari semua kejadian yang dilaporkan terjadi di Lautém (309/1,073), sebagian besar di periode 1979-83 (254/309).

- Manufahi (199/1,073), hampir semuanya pada 1979 (96/199), 1983 (25/199), dan 1998 (42/199) yang mungkin berhubungan dengan peristiwa Alas.
- Baucau (137/1,073), terutama pada 1979 - 80 (83/137).
- Manatuto (123/1,073) juga pada 1979 (90/123). Sebaliknya, kejadian-kejadian dilaporkan dari distrik-distrik Aileu, Ainaro, Covalima, Oecussi, dan Bobonaro umumnya dalam satu digit, tercatat hanya sekitar 3% dari total pelanggaran (36/1,073).

Tabel 13: Komandan-komandan Batalion 745 yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Posisi |
|--------------------|---------|-------------------------|----------|
| Theo Syafei | Mayor | 10/08/1978 – 1980 | Komandan |
| Sugiarto | Letkol | 1982 – 02/1986 | Komandan |
| Haryadi Sutanto | Letkol | 1992 – 1993 | Komandan |
| Didit Satrio | Letkol | 1995 – 08/1995 | Komandan |
| Simon G Sigar | Mayor | 06/08/1996 – 04/06/1998 | Komandan |
| Jacob Djoko Saroso | Mayor | 11/1998 – 1999 | Komandan |

Pertahanan sipil

Pelanggaran

Komisi menerima jumlah laporan pelanggaran yang sangat besar (19.055) oleh kelompok-kelompok pertahanan sipil, termasuk Hansip, pada setiap tahapan konflik dan di semua distrik, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan pasukan Indonesia. Jumlah ini mewakili lebih daripada seperlima dari semua pelanggaran dilaporkan yang diterima Komisi.

Tahun-tahun dengan jumlah pelanggaran terbesar adalah 1978 (2.222/19.055), 1979 (3.220/19.055), dan 1983 (2.285/19.055). Secara total, dalam enam tahun periode 1978-83 tercatat 69% (2.726/19.055) pelanggaran dilaporkan. Secara geografis distrik-distrik yang mengalami pelanggaran terbanyak adalah: Viqueque (3.709/19.055), Lautém (2.913/19.055), dan Baucau (2.739/19.055). Oleh karena dari hampir semua pelanggaran yang dilakukan oleh semua jenis kelompok pelaku, Dili cenderung mencatat jumlah lebih tinggi dari distrik lainnya, hanya sedikit di atas rata-rata pelanggaran dilaporkan yang dilakukan oleh kelompok pertahanan sipil.

Data berikut ini menunjukkan sejumlah perbedaan dengan pola yang umum sebagai berikut:

- Distrik Lautém: 56% (1.277/2.285) dari semua laporan pada 1983 yang berhubungan dengan Distrik Lautém
- Distrik Ainaro: 79% (429/540) dari semua laporan pada 1991 yang berhubungan dengan Distrik Ainaro

- Distrik Viqueque: 85% (171/204) dari semua laporan pada 1996 yang berhubungan dengan Distrik Viqueque
- Distrik Manufahi: 85% (305/357) dari semua laporan di tahun 1998 yang berhubungan dengan Distrik Manufahi
- Distrik Oecussi : Hampir semua laporan di distrik (86/88) adalah dari pelanggaran yang dilakukan pada 1999
- Distrik Bobonaro: Terdapat sejumlah kecil pelanggaran terlapor di Distrik Bobonaro antara 1984 dan 1998 (46/701), tetapi secara total meningkat secara tajam pada 1999 (170/701)

Satuan-satuan Tempur

Batalion Infanteri 144

Komisi menerima 180 laporan tentang pelanggaran oleh Batalion Infanteri 144 yang terkelompok di distrik-distrik tertentu sebagai berikut.

- Distrik Dili, 1981 – 12/180 laporan
- Ermera, 1998 – 45/180 laporan
- Covalima, 1999 – 82/180 laporan

Komisi tidak dapat menemukan nama-nama para Komandan Batalion Infanteri 144.

Batalion Infanteri 301

Komisi menerima 66 laporan tentang pelanggaran oleh Batalion Infanteri 301 sebagai berikut.

- Lautém, 1985 – 42/66 laporan.

Komisi tidak dapat menemukan nama-nama dari para Komandan Batalion Infanteri 301.

Batalion Infanteri 315

Komisi menerima 415 laporan tentang pelanggaran oleh Batalion infanteri 315 sebagai berikut.

- Ermera – 38/47 laporan dari 1977
- Lautém – lebih daripada setengah dari semua laporan (225/415) dari 1982 (34/225), 1983 (66/415), dan 1984 (122/415)
- Viqueque – 21/23 laporan dari 1992
- Baucau – 38/74 laporan dari 1992 dan 18/74 dari 1983

Tabel 14: Komandan-komandan Batalion Infanteri 315 yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Komando |
|-----------------------------|---------|-------------|----------|
| Fransiscus Xavierus (?) | | 1977–78 | Komandan |
| Halasan Simanjuntak (A. 74) | Mayor | 1991–92 | Komandan |

Batalion Infanteri 321 (Kostrad)

Komisi menerima 86 laporan tentang pelanggaran oleh Batalion infanteri 321 sebagai berikut.

- Baucau – 12/19 laporan dari tahun 1979
- Ainaro – 21/25 laporan dari tahun 1982
- Lautém – 13/31 laporan dari tahun 1983 dan 17/31 dari 1984

Tabel 15: Komandan Batalion Infanteri 321 yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Komando |
|------------------|---------|-------------|----------|
| Bambang Sukresno | | 20.3.92 - ? | Komandan |

Batalion infanteri 403

Komisi menerima 171 laporan tentang pelanggaran oleh Batalion Infanteri 403. Proporsi terbesar berhubungan dengan periode 1976 - 79 (148/171 atau 87%) dan sebagian besar berhubungan dengan tiga distrik berikut ini:

- Ermera – 28/45 laporan dari 1976
- Viqueque – 48/78 laporan dari 1978 dan 24 /78 dari 1979
- Manatuto –23/36 laporan dari 1979

Tabel 16: Komandan-komandan Batalion Infanteri 403 yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Komando |
|----------|---------|----------------|---------|
| Subianto | Kapten | ? – 10/03/1993 | |

Batalion Infanteri 407

Tahun penugasan: 1978, 1987, 1989

Komisi menerima 127 laporan tentang pelanggaran oleh Batalion Infanteri 407 dari periode dan distrik tertentu sebagaimana digambarkan berikut ini:

- Liquiçá – 14/16 laporan dari 1979
- Bobonaro – keseluruhan 27 laporan dari 1984

- Viqueque – 42/58 laporan dari 1992
- Covalima – keseluruhan 13 laporan dari 1999

Komisi tidak dapat menentukan nama-nama para Komandan Batalion Infanteri 407.

Batalion Infanteri 512

Tahun penugasan: 1975, 1993, 1996

Komisi menerima 278 laporan tentang pelanggaran oleh Batalion infanteri 512, 66% (183/278) dari laporan-laporan itu berhubungan dengan periode 1976 - 80, dan 20% (55/178) dengan 1984.

- Ermera – hampir semua laporan berhubungan dengan 1976 - 79 (148/176) (lihat juga Batalion infanteri 315 dan 403)
- Manufahi – keseluruhan 55 laporan berhubungan dengan 1984

Tabel 17: Komandan-komandan Batalion Infanteri 512 yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Komando |
|---------------------|---------|-----------------------|----------|
| M Basofi | | 1975 | |
| Dede Angga Heryanto | Mayor | 17/06/92-1995 | Komandan |
| Agus Suharyanto | Mayor | 1995 – 10/1995 | Komandan |
| Guruh R Manaf | | ? - [Sept] – X.12.98: | Komandan |
| Nono Musihono | | 1998 | |

Batalion Infanteri 514

Komisi menerima 71 laporan tentang pelanggaran oleh Batalion Infanteri 514, hampir semuanya berhubungan dengan 1982-83 (70/71) di distrik-distrik berikut ini.

- Viqueque – 19/20 laporan dari 1982
- Baucau – seluruh 15 laporan berasal dari 1982
- Distrik Dili – 19/18 laporan dari 1982
- Aileu – seluruh 18 laporan berasal dari 1983

Komisi tidak dapat menentukan nama-nama para Komandan Batalion Infanteri 514.

Batalion Infanteri 641

Tahun penugasan: 1992

Komisi menerima 156 laporan tentang pelanggaran oleh Batalion infanteri 614, semuanya dari Distrik Lautém di 1983 (142/156) dan 1984 (13/156).

Komisi tidak dapat menentukan nama-nama para Komandan Batalion infanteri 641.

SGI (Satuan Gabungan Intelijen)

Pelanggaran

Komisi telah menerima sejumlah besar (2,659) laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh SGI. Jumlah pelanggaran rata-rata sekitar 26 per tahun selama 1976-90 (dengan 64% dari kasus-kasus ini terjadi di Distrik Dili), kemudian meningkat secara tajam di periode 1991-99 menjadi rata-rata sekitar 240 per tahun (atau total 2.176 dari seluruh 2.659 laporan pelanggaran yang dilakukan oleh SGI). Laporan-laporan pelanggaran dalam periode 1990-99 (2.167/2.659 atau 82%) terkonsentrasi di tiga distrik: Ermera 42% (904/2.167), Dili 27% (581/2.167), dan Bobonaro 21% (460/2.167). Sebutan SGI mungkin terlalu luas untuk menyebut komandan tertentu. Sesuai dengan karakteristiknya, pernyataan-pernyataan menunjuk kepada institusi dalam pengertian yang luas, sementara data yang berhubungan dengan komandan tertentu cenderung sangat spesifik, menyebabkan pencocokan menjadi sulit.

Kopassandha/Kopassus

Komisi telah menerima sebuah jumlah yang sangat besar (8.710) dari laporan-laporan tentang pelanggaran oleh Kopassandha/Kopassus di semua distrik dan selama keseluruhan periode konflik. Jumlah terbesar pelanggaran dilaporkan terjadi pada 1983 (977/8.710) dan 1984 (909/8.710) (lihat pembahasan tentang Distrik Lautém dan Viqueque di bawah). Terdapat lebih sedikit laporan untuk 1988 (46/8.710) dan 1990 (51/8.710), dibandingkan dengan angka rata-rata. Berbeda dengan kecenderungan umum pelanggaran, tidak terdapat peningkatan yang berarti dalam laporan-laporan untuk 1999. Laporan-laporan pelanggaran tersebar di berbagai distrik sebagai berikut:

- Viqueque – 20% dari semua laporan terjadi di Distrik Viqueque (1,729). Proporsi terbesar dari pelanggaran ini adalah pada 1983 (352/1.729), yaitu lebih dari sepertiga dari seluruh pelanggaran di semua distrik pada 1983. Demikian halnya pada 1984 (425/1.729) terjadi di Viqueque, merupakan hampir setengah dari semua pelanggaran pada 1984 (425/909).
- Distrik Dili – Dili juga tercatat mempunyai sejumlah besar pelanggaran (1.480) dengan sebagian besar terjadi pada 1980 (276/1.480).
- Baucau – proporsi yang lebih besar (1.038/8.710) terjadi di distrik Baucau. Hampir semuanya terjadi pada 1986 (415/1.038).
- Lautém – sebuah proporsi besar dari total pelanggaran di Lautém (1.021) terjadi pada 1983 (331/1.021), yang merupakan lebih daripada sepertiga dari seluruh pelanggaran di semua distrik pada 1983 (331/977).
- Oecussi – secara umum terdapat sangat sedikit laporan pelanggaran di Oecussi sebelum 1999, namun hampir semua pelanggaran yang dilakukan oleh Kopassus terjadi pada 1976 (38/58) dan 1977 (18/58) dan sisanya (2/58) terjadi pada 1999.

Tabel 18: Komandan Kopassus/Unit Nanggala yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Komando |
|------------------------|---------|--|---|
| Yunus Yosfiah | Kapten | 1975 | Komandan, Nanggala 2 (Susi) |
| Tarub | Mayor | 1975 | Komandan, Nanggala 3 (Tuti) |
| Sofian Effendi | Mayor | 1975 | Komandan, Nanggala 4 (Umi) |
| Soegito | Letkol | 12/75- | Komandan, Nanggala 5 |
| Hendropriyono | Kapten | 1976: Dan Nanggala 13 (08/1976 - 02/1977 MAD) | |
| Hendropriyono | Mayor | 10.76 – 02.77 Nanggala 13 (Ton Sus/Tim Moruk) | |
| Soekiman | Mayor | 4.2.76 - ? Nanggala 8, Kopassandha | |
| A. M. Hendropriyono | Mayor | 10.76 – 02.77 | Komandan, Nanggala 13 |
| Prabowo Subianto | Letnan | 11.1978 – 04.79 | Komandan Tim Nanggala |
| Wismoyo Arismunandar | Kolonel | 06/04/1983 - 22/05/1985 | Komandan |
| Soegito | Kolonel | 8/85- | Komandan Koopskam dan Disivi Infanteri I, Kostrad |
| Luhut Pandjaitan | Kolonel | 1986 – 1988 | |
| Sjafrie Syamsudin | ? | 1986 | |
| B Ginting | Mayor | ? – 08/1986 | |
| Sintong Panjaitan | Kolonel | ? – 08/08/1987 | Komandan |
| Kuntara | Kolonel | 08/08/1987 - 08/1992 | Komandan |
| Gatot Purwanto | Letkol | 10.87 – 02.82 | Komandan, Nanggala 52 |
| M. K. Sirait | Letkol | 1988 - 06/1989 | Komandan, Nanggala 2 |
| Syahrial B. P. Peliung | Letkol | 06/1989 | Komandan, Nanggala 2 |
| Yayat Sudrajat | Letkol | 1999 | Komandan, Satgas Tribuana VIII (Kopassus), Timor Timur |
| Sunarko | Kolonel | 1999 (Asisten Intelijen Komandan Kopassus) | Komandan, Sektor A, Timor Timur (sampai 21 Juni , 1999) |
| Irwan Kusnadi | Kolonel | 1999 | |
| Rahman Zulkarnaen | Letnan | 1999 | Komandan Base Satgas Tribuana (Kopassus), Laruara, Lospalos |
| Syaful Anwar | Sersan | 1999 | Wakil Komandan Base Satgas Tribuana (Kopassus), , Laruara, Lospalos |

Marinir

Pelanggaran

Komisi menerima 156 laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Marinir, sebagian besar pada masa-masa awal konflik dan hanya di distrik tertentu. Lebih daripada 60% (97/156) terjadi dalam periode 1976-79. Terdapat sejumlah kecil laporan pelanggaran untuk 1983 (16/156). Ada juga sejumlah laporan setelah tahun ini dan sedikit meningkat pada 1998 (6/156) dan 1999 (6/156).

- Baucau – hampir setengah dari laporan-laporan pelanggaran terjadi di Distrik Baucau dalam periode 1976 – 1979
- Viqueque – ada sejumlah laporan pelanggaran (30/156) terjadi secara sporadis di Distrik Viqueque, kesemuanya terjadi sebelum 1986
- Aileu – hampir semua laporan dari Aileu terjadi pada 1982 (4/17) dan 1983 (14/17)

Brimob

Pelanggaran

Komisi menerima 528 laporan tentang pelanggaran oleh Brimob di tahap-tahap terakhir konflik, sebagian besar terjadi di Distrik Dili dan Baucau. 90% dari pelanggaran dilaporkan terjadi pada periode 1991 - 99, dengan jumlah tertinggi pada 1995 (126/528) dan dengan tingkatan yang cukup tinggi pada tahun-tahun terakhir 1996 – 99, dengan rata-rata 67 kejadian per tahun.

- Distrik Dili – suatu proporsi besar laporan berasal dari Dili (205/528)
- Distrik Baucau – suatu proporsi besar laporan berasal dari Baucau (178/528)

Rajawali*

Pelanggaran

Komisi menerima 881 laporan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Rajawali terutama terjadi pada tahap-tahap terakhir konflik. Periode 1994 - 99 mencatat 94% pelanggaran (830/881), terutama 1997 (255/881). Walaupun ada laporan-laporan dari seluruh distrik (kecuali Oecussi) pelanggaran-pelanggaran ini terkonsentrasi di distrik-distrik berikut ini:

- Ermera – lebih daripada setengah dari keseluruhan laporan adalah dari Ermera (504/881) dengan jumlah terbesar terjadi pada 1997 (165/504)
- Bobonaro – tercatat 98/881 laporan
- Dili – terdapat jumlah laporan yang relatif rendah untuk Distrik Dili (32/881)

* Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, Rajawali merupakan unit-unit Kopassus; sejak 1995 sampai akhir periode pendudukan, mereka merupakan satuan tempur di bawah komando Kostrad.

Tabel 19: Komandan Rajawali yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Komando |
|-------------------|---------|-------------|---------|
| Priyo Patmonoyogo | Mayor | 10/02/1996 | |

Milsas

Pelanggaran

Dari sejumlah besar laporan (1.026) yang diterima oleh Komisi tentang pelanggaran oleh Milsas terdapat kecenderungan yang sama dengan pola umum yaitu aktivitas yang lebih besar pada 1982 (112/1.026) dan pada akhir 1990-an: 1996 (168/1.026), 1998 (193/1.026), dan 1999 (194/1.026). Namun ada perbedaan yang cukup berarti dalam hal persebaran pelanggaran, yang menunjukkan Milsas terlibat dalam insiden-insiden besar tertentu di berbagai distrik dalam tahun tertentu, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- Covalima – 25/30 laporan pada 1976
- Manatuto – 81/112 laporan pada 1982
- Ainaro – 52/61 laporan pada 1991
- Manufahi – 38/43 laporan pada 1994
- Viqueque – 165/198 laporan pada 1998

Polisi Sipil*

Pelanggaran

Komisi menerima sebuah angka yang sangat besar dari laporan-laporan (4.316) tentang keterlibatan polisi dalam pelanggaran dari semua distrik dan pada keseluruhan periode konflik. Terdapat jumlah yang tinggi dari pelanggaran sehubungan dengan Polisi pada 1980 - 84 (704/4.316) dengan rata-rata 141 kejadian per tahun. Pelanggaran yang lebih tinggi lagi terjadi pada 1991 - 99 (3.065/4.316) dengan rata-rata 340 pelanggaran per tahun. Seperempat dari seluruh pelanggaran untuk keseluruhan konflik (1.037/4.316) terjadi pada 1999.

- Dili – lebih daripada seperempat dari keseluruhan insiden terlapor adalah di Distrik Dili (1.1130/4.316).
- Covalima – pada 1999 terjadi tingkatan yang tinggi dari laporan di Covalima (225/301).
- Oecussi – hampir semua insiden terlapor terjadi pada 1999 (463/486).

* Istilah 'Polisi' sedikit kurang jelas dan kabur serta kemungkinan telah digunakan dalam entri database sebagai frase yang mewakili semua. Nama institusi yang lebih spesifik pada level mikro (seperti 'Polsek') mungkin lebih berguna.

Polres

Pelanggaran

Komisi menerima 951 laporan pelanggaran di mana Polres disebut sebagai pelaku. Terdapat sebuah jumlah yang tinggi dari laporan-laporan pada 1984 (73/951) tetapi lebih daripada setengah dari laporan-laporan itu berasal dari periode 1996 - 99 (501/951). Distrik tertentu yang melaporkan jumlah pelanggaran yang lebih besar sebagai berikut:

- Distrik Dili – 177/951 laporan
- Distrik Ermera – 174/951 laporan
- Distrik Liquiçá – 139/951 laporan
- Distrik Manufahi – 124/951 laporan
- Distrik Oecussi – seluruh 78 laporan dari 1999

Tabel 20: Komandan Polres yang diketahui

| Nama | Pangkat | Tahun Tugas | Posisi |
|------------------------|---------------|---|--------------------------------|
| Bambang Hermanu | Letkol (Pol.) | 1999 | Kepala Polisi Resort, Aileu |
| Drs Rizali SH | Mayor (Pol.) | 1999 | Kepala Polisi Resort, Ainaro |
| Drs. Sodak C. Marpaung | Letkol (Pol.) | 1999 | Kepala Polisi Resort, Baucau |
| Drs Budi Susilo | Mayor (Pol.) | 1999 Didakwa oleh Unit Kejahatan Berat 18 - 2003 atas sejumlah kejahatan di Distrik Bobonaro pada 1999 | Kepala Polisi Resort, Bobonaro |
| Gatot Subiaktoro | Letkol (Pol) | 1999 | Kepala Polisi Resort, Covalima |
| Ery T B Gultom | Letkol (Pol) | 1999 | Kepala Polisi Resort, Ermera |
| Drs Irsan Wijaya | Letkol (Pol) | 1999 | Kepala Polisi Resort, Lautém |
| Adios Salova | Letkol (Pol) | 1999 Didakwa oleh Unit Kejahatan Berat 21 - 2001 atas sejumlah insiden di distrik Liquiçá pada tahun 1999. | Kepala Polisi Resort, Liquiçá |
| Drs. Joko Irianto | Mayor. (Pol) | 1999 | Kepala Polisi Resort, Liquiçá |
| Drs J A Sumampow | Letkol (Pol) | 1999 | Kepala Polisi Resort, Manatuto |
| Drs Abdul Rachim | Letkol (Pol) | 1999 | Kepala Polisi Resort, Manufahi |
| Drs Wilmar Marpaung | Letkol (Pol) | 1999 | Kepala Polisi Resort, Oecussi |
| Drs Abdul Rahman | Letkol (Pol) | 1999 | Kepala Polisi Resort, Viqueque |
| Hulman Gultom | Letkol (Pol) | 1999 | Kepala Polisi Resort, Dili |

Polsek

Pelanggaran

Laporan-laporan tentang pelanggaran oleh Polsek mengikuti pola yang sama dengan Polres. Komisi menerima 676 laporan tentang pelanggaran di mana Polsek disebut sebagai pelaku. Terdapat jumlah laporan yang tinggi pada 1980 (31/676) tetapi lebih daripada 64% dari laporan-laporan itu berasal dari periode 1996 - 99 (434/676), dengan proporsi terbesar berasal dari 1999 (251/676). Distrik-distrik tertentu yang melaporkan sejumlah besar pelanggaran sebagai berikut:

- Distrik Oecussi – 175/177 laporan dari 1999. Ini adalah jumlah yang sangat tinggi untuk Distrik Oecussi, merupakan lebih dari seperempat dari semua laporan tentang Polsek (177/676)
- Distrik Ermera – 94/676 laporan
- Distrik Dili – 79/676 laporan
- Distrik Liquiçá – 62/676 laporan
- Distrik Manufahi – 36/676 laporan

Pemerintah Setempat*

Komisi menerima suatu jumlah yang sangat besar dari laporan-laporan pelanggaran (6.497) oleh para anggota unit-unit administratif yang hanya diidentifikasi sebagai 'Pemerintah' (6.467) di seluruh distrik selama seluruh periode konflik. Lebih dari setengah laporan tentang pelanggaran terjadi dalam periode 1979-84 (3.628/6.467), dengan jumlah tertinggi pada 1979 (656/6.467), 1981 (803/6.467) dan 1983 (828/6.467). Angka tertinggi dari laporan-laporan itu adalah dari 1999 (920/6.467).

- Laporan-laporan yang terbanyak berasal dari distrik-distrik sebagai berikut:
- Distrik Dili (1.327/6.467)
- Distrik Viqueque (1.017/6.467)
- Distrik Lautém (794/6.467)
- Distrik Baucau (632/6.467)
- Distrik Oecussi – hampir semua laporan berasal dari 1999 (410/431)
- Distrik Covalima – lebih dari setengah laporan berasal dari 1999 (121/226)

* Istilah 'pemerintah' mungkin telah digunakan sebagai frase yang mewakili semua. Sebutan yang lebih spesifik tentang institusi-institusi mikro pemerintah (misalnya di tingkat subdistrik) mungkin lebih berguna.

Pemerintah Provinsi

Pelanggaran

Komisi menerima 269 laporan tentang pelanggaran oleh Pemerintah Provinsi. Tidak ada pola pelanggaran yang umum atau meluas, tetapi lebih merupakan kejadian-kejadian terpisah. Hampir semua laporan tentang pelanggaran terjadi dalam periode 1979 - 83 (226/269 atau 85%) dan dalam tingkatan yang lebih rendah pada 1999 (28/269).

Pemerintah Kabupaten

Pelanggaran

Pola laporan pelanggaran adalah sama dengan pemerintah provinsi. Komisi menerima 360 laporan pelanggaran oleh Pemerintah Kabupaten. Tidak ada pola pelanggaran yang umum atau meluas, tetapi lebih merupakan kejadian-kejadian terpisah. Hampir semua pelanggaran terjadi dalam periode 1979 - 83 (171/360 atau 48%) dengan tingkatan yang sama dengan laporan-laporan dari 1991 (22/360), 1992 (32/360), 1995 (24/360), dan 1999 (32/360).

Pemerintah Desa

Pelanggaran

Komisi menerima jumlah laporan yang sangat besar tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (2.266). Pola laporan-laporan itu meluas di seluruh distrik selama keseluruhan periode konflik dan juga ada keterlibatan dalam insiden tertentu sebagaimana yang terjadi pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Sebuah proporsi besar dari laporan-laporan adalah dari periode 1979 - 84 (983/2.266 atau 43%), dengan jumlah terbesar pada 1991 (115/2.266 – dengan 100 dari insiden-insiden ini terjadi di Distrik Ainaro) dan 1999 (527/2.266 – dengan 317 dari insiden-insiden ini terjadi di Oecussi).

Lampiran 3: Perorangan dengan komando tingkat tinggi

| Anggota Pemerintahan | |
|----------------------------------|---|
| Soeharto | Presiden, 1967-98 |
| Jenderal Maradean Panggabean | Menteri Pertahanan dan Keamanan, 1973-1978/ Menteri Koordinator Politik dan Keamanan 1978-83 |
| Jenderal Andi Mohammad Jusuf | Menteri, Pertahanan dan Keamanan 1978-83 |
| Jenderal S Poniman | Menteri Pertahanan dan Keamanan, 1983-1988 |
| Jenderal Surono | Menteri Koordinator Politik dan Keamanan 1983-88 |
| Jenderal L B Murdani | Menteri Pertahanan dan Keamanan, 1988-93 |
| Laksamana Sudomo | Menteri Koordinator Politik dan Keamanan , 1988-93 |
| Jenderal Edy Sudradjat | Menteri Pertahanan dan Keamanan, 1993-98 |
| Jenderal Soesilo Soedarman | Menteri Koordinator Politik dan Keamanan , 1993-98 |
| Jenderal Wiranto | Menteri Pertahanan dan Keamanan, 1998-99 |
| Jenderal Faisal Tanjung | Menteri Koordinator Politik dan Keamanan , 1998-99 |
| Letnan Jenderal AM Hendropriyono | Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, 1998-99 |
| Letnan Jenderal Yunus Yosfiah | Menteri Penerangan, 1998-99 |

| Kepala, Bakin (Badan Koordinasi Intelijen) | |
|--|------------------------------|
| Jenderal Yoga Sugama | 28 Januari 1974-2 Juni 1989 |
| Mayor Jenderal Soedibyo | 2 Juni 1989-1 April 1996 |
| Letnan Jenderal Moetojib | April 1996-17 September 1998 |
| Letnan Jenderal Zaini Azhar Maulani | 17 September 1998- |

| Kepala, Opsus (Operasi Khusus) | |
|--------------------------------|--|
| Letnan-Jenderal Ali Murtopo | 1962-74 (Wakil III, Bakin, 1974-1978/Menteri Penerangan 1978-83) |

| Anggota-anggota Komando Angkatan Bersenjata | |
|---|-----------------------------|
| Panglima, Angkatan Bersenjata | |
| Jenderal Maradean Panggabean | Maret 1973-April 1978 |
| Jenderal Andi Mohammad Jusuf | April 1978-Maret 1983 |
| Jenderal L B Murdani | 28 Maret 1983-Februari 1988 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Jenderal Try Sutrisno | 27 Februari 1988-19 Februari 1993 |
| Jenderal Edi Sudradjat | Februari-Mei 1993 |
| Letnan Jenderal Faisal Tanjung | 21 Mei 1993-12 Februari 1998 |
| Jenderal Wiranto | 20 Februari 1998 |
| Kepala Staf Angkatan Darat | |
| Jenderal Makmun Murod | April 1974-Januari 1978 |
| Jenderal Widodo | Januari 1978-April 1980 |
| Jenderal S Poniman | April 1980-Maret 1983 |
| Jenderal Rudini | Maret 1983-Juni 1986 |
| Jenderal Try Sutrisno | Juni 1986-Februari 1988 |
| Jenderal Edy Sudradjat | Februari 1988-Februari 1993 |
| Jenderal Wismoyo Arismunandar | April 1993-Februari 1995 |
| Jenderal R Hartono | Februari 1995-Juni 1997 |
| Jenderal Wiranto | Juni 1997-Februari 1998 |
| Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo | Februari 1998- |
| Kepala Staf Angkatan Udara | |
| Marsekal Udara Saleh Basarah | April 1973-Juni 1977 |
| Maesekal Muda Udara Ashadi Tjahjadi | Juni 1977-Desember 1982 |
| Marsekal Udara Sukardi | Desember 1982-April 1986 |
| Marsekal Udara Oetomo | April 1986-Maret 1990 |
| Marsekal Udara Siboen Dipoadmodjo | Maret 1990-April 1993 |
| Marsekal Muda Udara Rilo Pambudi | April 1993-Maret 1996 |
| Marsekal Udara Sutria Tubagus | Maret 1996-Juni 1998 |
| Marsekal Udara Hanafie Asnan | Juni 1998- |
| Kepala Staff Angkatan Laut | |
| Laksamana R Subijakto | Juni 1974-Juni 1977 |
| Laksamana Muda Walujo Sugito | Juni 1977-Desember 1982 |
| Laksamana Mohammad Romly | Desember 1982-April 1986 |
| Laksamana Rudolf Kasenda | April 1986-Maret 1989 |
| Laksamana Muda Muhammad Arifin | Maret 1989-April 1993 |
| Laksamana Tanto Koeswanto | April 1993-Maret 1996 |
| Laksamana Arief Kushariadi | Maret 1996-Juni 1998 |
| Laksamana Widodo Adisutjipto | Juni 1998- |
| Asisten Operasi Panglima Angkatan Bersenjata (Asops) | |
| Marsekal Muda Udara Sukardi | Mei 1975-Juni 1977 |
| Mayor Jenderal Seno Hartono | Juni 1977-Juli 1981 |

| | |
|---|--|
| Letnan Jenderal M Sanif | Juli 1981-November 1984 |
| Marsekal Pertama Ibnu Subroto | November 1984-April 1985 |
| Mayor Jenderal Edy Sudradjat | April 1985-Juni 1986 |
| Laksamana Muda Soedibyo Rahardjo | Juni 1986-Januari 1988 |
| Mayor Jenderal I Gde Awet Sara | 1988-Maret 1990 |
| Mayor Jenderal Sugeng Subroto | Mei 1990-Agustus 1992 |
| Mayor Jenderal H B L Mantiri | Agustus 1992-Juli 1993 |
| Mayor Jenderal Sofyan Effendi | Juli 1993-Juli 1995 |
| Laksamana Muda Soeratmin | Juli 1994-Agustus 1997 |
| Mayor Jenderal Fachrul Razi | Agustus 1997-Maret 1998 |
| Mayor Jenderal Johny Lumintang | Maret 1998-Oktober 1998 |
| Mayor Jenderal Endriartono Sutarto | Oktober 1998- |
| Asisten Intelijen Panglima Angkatan Bersenjata (Aspam Intel/Asintel) | |
| Mayor Jenderal L Benny Murdani | Agustus 1974-Maret 1983 |
| Mayor Jenderal Sutaryo | Maret 1983- November 1987 |
| Mayor Jenderal Soedibyo | ? -11 November 1987 |
| Mayor Jenderal I Gde Awet Sara | 11 November 1987-Oktober 1988 |
| Mayor Jenderal M I Sutaryo | Oktober 1988-Agustus 1990 |
| Mayor Jenderal Asmono Arismunandar | Agustus 1990-Agustus 1992 |
| Mayor Jenderal Bantu Hardjijo | Agustus 1992-25 Januari 1994 |
| Mayor Jenderal Arie Sudewo | 25 Januari 1994-1 September 1994 |
| Mayor Jenderal Syamsir Siregar | 1 September 1994-November 1995 |
| Mayor Jenderal Yusuf Kartanegara | November 1995-Agustus 1997 |
| Laksamana Muda Yuswadji | Agustus 1997-Maret 1998 |
| Laksamana Muda Berty Ekel | Maret 1998- |
| Asisten Teritorial Panglima Angkatan Bersenjata (Aster) | |
| Mayor Jenderal Dr Oemar Said | 14 Maret 1974-18 Januari 1977 |
| Mayor Jenderal Azis Bustam | 18 Januari 1977-Agustus 1981 |
| Mayor Jenderal Naja Iskandar Sumantri | Agustus 1981-30 Mei 1983 |
| Mayor Jenderal Eddy Marzuki Nalapraya | 30 Mei 1983-November 1984 |
| Mayor Jenderal Sarwono | November 1984 (15 Mei 1985?) -Agustus 1986 |
| Mayor Jenderal Sutahan Mangoensentono [?] | Agustus 1986-7 Oktober 1987 |
| Mayor Jenderal Mochtar | Oktober 1987- |
| Mayor Jenderal Nana Narundana | 1988-21 Juni 1990 |
| Mayor Jenderal Soegito | Agustus 1990 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Mayor Jenderal R Pramono | April 1993-Januari 1994 |
| Mayor Jenderal Moch. Ma'ruf | Januari 1994-Februari 1995 |
| Mayor Jenderal Tamlicha Ali | Februari 1995-September 1995 |
| Mayor Jenderal Arie Kumaat | September 1995-September 1997 |
| Mayor Jenderal Deddy Sudarmadji | September 1997-Juni 1998 |
| Mayor Jenderal Syafrie Syamsuddin | Juni 1998-September 1998 |
| Mayor Jenderal Djoko Mulono | September 1998- |
| Panglima, Kowilhan II (Jawa, Madura, Nusa Tenggara) | |
| Letnan Jenderal Widodo | Mei 1974-Januari 1978 |
| Letnan Jenderal Willy Widjojo Sudjono | Januari 1978-Januari 1981 |
| Letnan Jenderal Wiyogo Atmodarminto | Januari 1981 |
| Letnan Jenderal Yogie Suwardi Memet | November 1983 |
| Komandan, Kostrad | |
| Mayor Jenderal Leo Lopulisa | Januari 1975-Januari 1978 |
| Mayor Jenderal Wiyogo Atmodarminto | Januari 1978-Maret 1980 |
| Brigadir Jenderal Ismail | Maret 1980-Januari 1981 |
| Mayor Jenderal Rudini | Januari 1981- Mei 1983 |
| Letnan Jenderal Soeweno | Mei 1983-Januari 1986 |
| Mayor Jenderal Soeripto | Januari 1986-Juli 1987 |
| Mayor Jenderal Adolf Sahala Rajagukguk | Juli 1987-Maret 1988 |
| Mayor Jenderal Soegito | Maret 1988-Agustus 1990 |
| Mayor Jenderal Wismoyo Arismunandar | Agustus 1990-Juli 1992 |
| Mayor Jenderal Kuntara | Juli 1992-September 1994 |
| Mayor Jenderal Tarub | September 1994-April 1996 |
| Letnan Jenderal Wiranto | April 1996-Juni 1997 |
| Letnan Jenderal Sugiyono | Juni 1997-Maret 1998 |
| Letnan Jenderal Prabowo Subianto | Maret 1998-Mei 1998 |
| Mayor Jenderal Johny Lumintang | Mei 1998-Mei 1998 |
| Letnan Jenderal Djamari Chaniago | Mei 1998- |
| Komandan, Kopassandha/Kopassus (RPKAD) | |
| Brigadir Jenderal R Yogi Suwardi Memet | Mei 1975-April 1983 |
| Brigadir Jenderal Wismoyo Arismunandar | April 1983-Mei 1985 |
| Brigadir Jenderal Sintong Panjaitan | Mei 1985-Agustus 1985 |
| Brigadir Jenderal Kuntara | Agustus 1987-Juli 1992 |
| Brigadir Jenderal Tarub | Juli 1992-Juli 1993 |
| Brigadir Jenderal Agum Gumelar | Juli 1993-September 1994 |

| | |
|---|------------------------------|
| Brigadir Jenderal Subagyo Hari Siswoyo | September 1994-Desember 1995 |
| Brigadir Jenderal Prabowo Subianto | Desember 1995-Maret 1998 |
| Mayor Jenderal H Muchdi Purwo Pranyoto | Maret 1998-Mei 1998 |
| Mayor Jenderal Syahrir M S | Mei 1998 |
| Kepala Staf Umum (Kasum) | |
| Letnan Jenderal Himawan Sutanto | Februari 1983-November 1984 |
| Marsekal Muda Udara Oetomo | November 1984-April 1986 |
| Letnan Jenderal Dading Kalbuadi | April 1986-Januari 1987 |
| Letnan Jenderal Ida Bagus Sudjana | Januari 1987-Januari 1988 |
| Laksamana Soedibyo Rahardjo | Januari 1988-Juli 1992 |
| Letnan Jenderal Feisal Tanjung | Juli 1992-Mei 1993 |
| Mayor Jenderal Mantiri | Mei 1993-Februari 1995 |
| Letnan Jenderal Soeyono | Februari 1995-Agustus 1996 |
| Letnan Jenderal Tarub | Agustus 1996-Maret 1998 |
| Letnan Jenderal Fachrul Razul | Maret 1998-April 1999 |
| Letnan Jenderal Sugiono | April 1999- |
| Komandan, Korps Marinir | |
| Letnan Jenderal Kahpi Suriadiredja | Juli 1977-Mei 1983 |
| Brigadir Jenderal Muntaram | Mei 1983-Januari 1987 |
| Brigadir Jenderal Aminullah Ibrahim | Januari 1987-Agustus 1990 |
| Mayor Jenderal Baroto Sardadi | Agustus 1990-November 1992 |
| Brigadir Jenderal Gatur Chaliq | Desember 1992-April 1994 |
| Mayor Jenderal Djoko Pramono | April 1994-Februari 1996 |
| Brigadir Jenderal Suharto | Februari 1996- |
| Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat | |
| Mayor Jenderal Ari Bandiyoko | Mei 1983-Juni 1985 |
| Brigadir Jenderal I Gde Awet Sara | Juni 1985-April 1988 |
| Brigadir Jenderal Soeharto | April 1988-Januari 1991 |
| Brigadir Jenderal Soerjadi | Januari 1991-Agustus 1992 |
| Brigadir Jenderal Hadi Baroto | Agustus 1992-Juli 1994 |
| Brigadir Jenderal Kodjin | Juli 1994-April 1996 |
| Mayor Jenderal Farid Zaenuddin | Mei 1996-September 1996 |
| Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim | September 1996-Agustus 1997 |
| Mayor Jenderal Yudomo Sastrosuhardjo | Agustus 1997-Juni 1998 |
| Mayor Jenderal Noor Aman | Juni 1998- |

| Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat | |
|---|-----------------------------------|
| Mayor Jenderal Prajitno | Mei 1983-Juni 1985 |
| Brigadir Jenderal Adolf Sahala Rajagukguk | Juni 1985-Maret 1986 |
| Mayor Jenderal Zein Maulani | Maret 1986-Maret 1988 |
| Brigadir Jenderal Putu Sukreta Suranta | Maret 1988-September 1989 |
| Mayor Jenderal Abdul Nurhaman | September 1989-Agustus 1992 |
| Brigadir Jenderal Joko Lelono | Agustus 1992-Agustus 1993 |
| Brigadir Jenderal Pieter Sitompul | Agustus 1993-Maret 1995 |
| Mayor Jenderal Makmun Rasyid | Maret 1995-Agustus 1997 |
| Mayor Jenderal Suaidi Marasabessy | Agustus 1997-Mei 1998 |
| Mayor Jenderal Kiki Syahnakri | Mei 1998- |
| BIA (Badan Intelijen ABRI) | |
| Mayor Jenderal Syamsir Siregar | November 1994-10 September 1996 |
| Mayor Jenderal Farid Zainuddin | 10 September 1996-14 Agustus 1997 |
| Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim | 14 Agustus 1997-4 Januari 1999 |
| Mayor Jenderal Tyasno Sudarto | 4 Januari 1999- |
| Komandan, Kodam XVI Udayana/Kodam IX Udayana | |
| Brigadir Jenderal Ignatius Pranoto Kusomo | Februari 1974-Maret 1976 |
| Brigadir Jenderal Soeweno | Maret 1976-Oktober 1978 |
| Brigadir Jenderal Dading Kalbuadi | Oktober 1978-Mei 1983 |
| Mayor Jenderal R P D Soetarto | April 1985-Maret 1986 |
| Mayor Jenderal Adolf Sahala Rajagukguk | Maret 1986-Agustus 1987 |
| Brigadir Jenderal Djoko Pramono | Agustus 1987-Agustus 1988 |
| Mayor Jenderal Sintong Panjaitan | Agustus 1988-Januari 1992 |
| Mayor Jenderal Herman Bernard Leopold Mantiri | Januari 1992-Agustus 1992 |
| Mayor Jenderal Soewardi | Agustus 1992-Maret 1993 |
| Brigadir Jenderal Theo Syafei | Maret 1993-Februari 1994 |
| Mayor Jenderal R Adeng Ruchiatna Purwadirdja | Februari 1994-September 1995 |
| Mayor Jenderal H Abdul Rivai | September 1995-Juli 1997 |
| Mayor Jenderal Syahrir M S | Juli 1997-Mei 1998 (RPKAD) |
| Mayor Jenderal Yudomo Sastrosuhardjo | Mei 1998-Juni 1998 |
| Mayor Jenderal Adam Damiri | Juni 1998- |

| Kepala Polisi Republik Indonesia | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Jenderal Polisi Widodo Budidarmo | Agustus 1974-September 1978 |
| Jenderal Polisi Awaloeddin Djamin | September 1978-Desember 1982 |
| Jenderal Polisi Anton Sudjarwo | Desember 1982-Juli 1986 |
| Jenderal Polisi Moch. Sanoesi | Juli 1986-Februari 1991 |
| Jenderal Polisi Kunarto | Februari 1991-April 1993 |
| Jenderal Polisi Banurusman | April 1993-Maret 1996 |
| Jenderal Polisi Dibyo Widodo | Maret 1996-Juni 1998 |
| Jenderal Polisi Roesmanhadi | Juni 1998- |

Lampiran 4: Karier para perwira Indonesia yang bertugas di Timor-Leste

| Karir para perwira Indonesia yang bertugas di Timor-Leste | | |
|---|---|---|
| Nama | Tugas di Timor-Leste | Jabatan Tertinggi yang dipegang |
| Adang Ruchiatna Purwadirdja | 1981-?: Komandan Batalion 133 | Februari 1994-September 1995: Panglima Kodam IX Udayana |
| | 1986-87: Asisten Intelijen Kepala Staf, Divisi Infanteri I Kostrad/Asisten Intelijen, Koopskam; | |
| Adolf Sahala Rajagukguk | 1976: Komandan, Brigade Infanteri 5 | Juni 1985-Maret 1986; Asisten Dua, Operasi; |
| | 1978-79: Komandan, RTP 16 | Maret 1986-Agustus 1987: Panglima Kodam IX Udayana |
| | 1979-1982: Komandan, Korem 164 Dili | Juli 1987-Maret 1988: Panglima, Kostrad Desember 1988-Agustus 1992: Wakil Kepala Staf Angkatan Darat |

| | | |
|---------------------|--|---|
| Dading Kalbuadi | 1975: Operasi Flamboyan | Agustus 1978-Mei 1983: Panglima, Kodam IX Udayana |
| | -Maret 1976 Asisten Intelijen, Kogasgab | Februari 1983-18 April 1986: Asisten Logistik Panglima ABRI |
| | Maret 1976-Agustus 1978: Komandan, Kodahamkam | April 1986-Januari 1987: Kepala Staf Umum ABRI |
| Edi Sudradjat | 1978-79: Kepala Staf, Kogasgab | 1986-88: Wakil Kepala Staf Angkatan Darat |
| | | 1988- 1993: Kepala Staf Angkatan Darat |
| | | 1993: Panglima, Angkatan Bersenjata |
| Endriartono Sutarto | 1976: Komandan Kompi, Batalion 328 | Oktober 1998-: Asisten Operasi Kepala Staf umum ABRI |
| | 1979: Komandan Kompi, Batalion 330 | |
| Faisal Tanjung | 1975: Kepala Staf, Brigade Infanteri Lintas Udara 17, Kostrad | 1983-: Komandan Pasukan Tempur Udara, Kostrad |
| | | Juli 1992-Mei 1993: Kepala Staf Umum ABRI |
| | | Mei 1993-Februari 1998 Panglima, ABRI |
| | | Maret 1998-: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan |
| Hendropriyono | 1976: Bertugas di Nanggala 8; Komandan, Nanggala 13 | 1993-94: Panglima, Kodam Jaya (Jakarta Raya); |
| | | 1999: Maret 1998-: Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan |
| Johny Lumintang | 1993-94: Komandan, Korem 164 Dili | Agustus 1994-Juni 1995: Komandan, Divisi Infanteri I Kostrad |
| | | Agustus 1996-Maret 1998: Panglima, Kodam VIII Trikora |
| | | Maret 1998-Oktober 1998: Asisten Operasi Kepala Staf Umum ABRI |
| | | Oktober 1998: Wakil Kepala Staf Angkatan Darat |
| Kahpi Suriadiredja | Komandan, operasi-operasi Marinir di Timor-Leste selama Operasi Seroja | Juli 1977-Mei 1983: Komandan, Marinir |
| | | 1983-: Panglima, Komando Wilayah Pertahanan Keamanan IV (Kowilhan IV) |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Kiki Syahnakri | 1981: Wakil Komandan, Batalion 744 | Mei 1998: Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat |
| | 1981-?: Komandan Batalion 502 Kostrad | |
| | 1993-September 1994: Wakil Komandan, Korem 164 Dili | |
| | September 1994-Mei 1995: Komandan, Korem 164 Dili | |
| | September 1999: Panglima, Komando Operasi Penguasa Darurat Militer di Timor Timur | |
| H B L Mantiri | 1976 (?): Komandan, Batalion 700 | Mei 1993-Februari 1995 Kepala Staf Umum ABRI |
| | 1986-88: Komandan Koopskam/ Division Infanteri I Kostrad | |
| | Januari-Agustus 1992 Panglima Kodam IX Udayana | |
| Mochammad Ma'ruf | 1987-88: Komandan, Korem 164 Dili | Januari 1994-Februari 1995: Asisten Teritorial |
| | | 1995-: Kepala Staf Sosial dan Politik ABRI |
| Muchdi Purwo Pranyoto | Dilaporkan melakukan empat kali perjalanan ke Timor- Leste, termasuk di antaranya sebagai perwira intelijen yang melakukan interogasi setelah penyerangan 10 Juni 1980 | Maret 1998-Mei 1998: Komandan, Kopassus |
| Prabowo Subianto | 1976: bertugas di Nanggala 10 | 1995: Wakil Komandan, Kopassus |
| | 1978 Komandan, Nanggala 28 | Desember 1995-20 Maret 1998: Komandan, Kopassus |
| | 1983-84 Komandan, Chandraca 8 | Maret 1998-Mei 1998: Panglima, Kostrad |
| | 1989: Yonif 328 Kostrad | |
| Rudini, 24 Januari 1981-24 Mei 1983 | 1975: Komandan, Pasukan Tempur Udara II/Kostrad | 1977-78: Kepala Staf, Kostrad |
| | 1976: Panglima, Komando Tempur Lintas Udara/Kostrad | 1981-83: Panglima, Kostrad |
| | | Maret 1983-Juni 1986: Kepala Staf Angkatan Darat |
| | | 1988-93: Menteri Dalam Negeri |
| Raja Kami Sembiring Meliala | 1979: Komandan, RTP 18 | Panglima, Kodam XVII |
| Slamet Kirbiantoro | 1975: Anggota Grup 2 Kopassandha, bertugas dalam Tim Susi | |
| | 1987-88: Komandan, Kodim Viqueque | |
| | 1992-93: Komandan, Sektor A | |

| | | |
|-------------------|--|---|
| Ryamizard Ryacudu | ?-1995: Komandan, Sektor A | 1998: Komandan, Divisi Infanteri II Kostrad |
| | | 1998-99: Kepala Staf, Kostrad |
| | | 1999-: Panglima Kodam V/ Brawijaya |
| | | 2002-: Kepala Staf Angkatan Darat |
| Soegito | 1975: Komandan, Nanggala 5 | 1988-90: Panglima, Kostrad |
| | 1983-Agustus 1985: Komandan, Koopskam/ Division I, Kostrad | |
| Soeweno | 1975: Komandan, Kogasgab Seroja | 1978-83: Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat |
| | 1976-78: Panglima, Kodam Udayana XVI | 1983-86: Panglima, Kostrad |
| | Komandan, Kodahankam | |
| Sofyan Effendi | 1975-76: Komandan Nanggala 4 (Tim Umi) | 1993: Panglima, Kodam VII Wirabuana |
| | | 1993-95: Asisten Operasi Kepala Staf Umum ABRI |
| Tamlicha Ali | 1978-79: Komandan Linud 700 | 1992: Komandan Kontingen Indonesian untuk Pasukan Penjaga |
| | | Perdamaian PBB di Kamboja |
| | | 1993: Panglima, Kodam VII Wirabuana |
| | | Februari-September 1995: Asisten Kepala Staf Teritorial |
| | | September 1995-Januari 1998: Asisten Perencanaan Umum Kepala Staf Umum ABRI |
| Tarub | 1975: Komandan, Nanggala 3 (Tim Tuti) | 1989-92: Wakil Komandan, Kopassus |
| | | Juli 1992-Juli 1993: Komandan, Kopassus |
| | | 1993-94: Panglima, Kodam VIII Trikora |
| | | September 1994-April 1996: Panglima, Kostrad |
| | | Agustus 1996-Maret 1998: Kepala Staf Umum |
| Theo Syafei | 1975: Komandan, Nanggala ? (Tim Susi) | 1995-95: Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI |
| | 1978-80: Komandan, Batalion 745 | |
| | 1980-82: Wakil Asisten Operasi, Kodam IX | |
| | 1982-84: Wakil Panglima, Kolakops | |
| | 1992-1993: Panglima, Kolakops | |
| | 30 Maret 1993-8 Februari 1994: Panglima, Kodam IX Udayana | |

| | | |
|---------------------|--|---|
| Try Sutrisno | 1978-79: Kepala Staf, Kodam IX Udayana | 1985-1985: Panglima, Kodam Jaya |
| | | 1985-1986: Wakil Kepala Staf Angkatan Darat |
| | | 1986-1988: Kepala Staf Angkatan Darat |
| | | 1988-93: Panglima, ABRI |
| | | 1993-98: Wakil Presiden |
| Tyasno Sudarto | 1978: Wakil Komandan, Batalion 202 | 1998-99: Panglima, Kodam IV Diponegoro |
| | | 1999-: Kepala, BIA (Badan Intelijen ABRI) |
| Wiranto | 1981 atau 1982-83: Komandan, Batalion 713 | 1990-93: Kepala Staf, Kodam Jaya |
| | | 1994-96 Panglima, Kodam Jaya |
| | | 1996-98: Kepala Staf Angkatan Darat |
| | | 1998-: Panglima, ABRI |
| Yacob Dasto | Bertugas dalam Operasi Seroja | 1992-93: Kepala Staf, Kostrad |
| | Komandan Sektor, Koopskam | 1993-95: Panglima Kodam VI Tanjungpura |
| Yunus Yosfiah | 1975: Komandan, Nanggala 2 (Tim Susi) | 1994-95: Panglima, Kodam II Sriwijaya |
| | 1978-79: Komandan, Batalion 744 | 1997-98: Kepala Staf Sosial dan Politik ABRI |
| | ?-1985: Asisten Operasi Kepala Staf, Kodam XVI Udayana | Mei-Oktober 1999: Menteri Penerangan |
| | 1985-87: Komandan, Korem 164 Dili | |
| Zacky Anwar Makarim | 1982: Komandan, Pusat Interograsi Kotis, Saelari, Baucau | September 1996-Agustus 1997: Asisten Keamanan Kepala Staf Angkatan Darat, |
| | | Agustus 1997-Januari 1999: Kepala, BIA (Badan Intelijen ABRI) |
| | | Juni-September 1999: Penasihat Keamanan Satuan Tugas Panitia |
| | | Penentuan Pendapat Timor Timur (Satgas P3TT). |
| | | |

Catatan akhir

1. Regulasi 10/2001 Ayat 13.1 (i)
2. Lihat *Prosecutor v Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic and Esad Landzo*, ICTY Case No IT-96-21, Appeals Chamber Judgment (Keputusan Pengadilan Banding), 20 Februari 2001, paragraf 196-198.
3. Lihat misalnya Pasal 7(3) Statuta ICTY; Pasal 6(3) Statuta ICTR; dan Pasal 28 Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal Internasional 1998.
4. Lihat Pasal 7(1)(h) Statuta ICC
5. *Prosecutor v Tadic*, Appeals Chamber decision on Jurisdiction (Keputusan Pengadilan Banding tentang yurisdiksi), paragraf 134.
6. Wawancara CAVR dengan Mario Carrascalão.
7. Lihat *Prosecutor v Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic and Esad Landzo*, ICTY Case No IT-96-21, Appeals Chamber Judgment, 20 Februari 2001, paragraf 196-198.
8. Lihat, misalnya, Pasal 7(3) Statuta ICTY; Pasal 6(3) Statuta ICTR; dan Pasal 28 Statuta Rome untuk Pengadilan Kriminal Internasional 1998.
9. Lihat khususnya Pasal 68 Konvensi Jenewa Keempat
10. Joint Assessment Mission, *East Timor-Building A Nation, A Framework for Reconstruction and Development*, November 1999, hal. 20.
11. Lihat Kasus tentang Kegiatan Militer dan Paramiliter di dan melawan Nikaragua (USA v Nikaragua) yang didiskusikan dalam Bab 2, Mandat Komisi.
12. Pasal 3, Kesepakatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Portugal tentang persoalan East Timor
13. Pasal 1, Kesepakatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Portugal tentang Keamanan.
14. Pasal 1(3) ICCPR dan Pasal 1(3) ICESCR.
15. Human Rights Committee General Comment (Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia) 12, paragraf 6.
16. Human Rights Committee General Comment (Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia) 12, paragraf 6.
17. Pasal 1(3) ICCPR dan Pasal 1(3) ICESCR.
18. Human Rights Committee General Comment (Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia) 12, paragraf 6.
19. Pasal 3, Kesepakatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Portugal tentang persoalan East Timor
20. Pasal 1, *Ibid*
21. Pasal 4, *Ibid*
22. Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, hal 256, catatan kaki 17.
23. Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, Bab 11.
24. Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, Bab 10.3
25. Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, Bab 10.10
26. Timor-Leste, Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat, Dakwaan terhadap Wiranto dkk. Februari 2003.
27. "Lt. Kol. Supadi," *Masters of Terror*, <http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm>
28. Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 98.
29. Lihat *Laporan KPP HAM mengenai pelanggaran yang dilakukan di Timor Timur pada tahun 1999* (KPP HAM), 31/01/2000, paragraf 51.
30. Cuplikan Film kejadian yang disaksikan oleh Komisi, Arsip CAVR
31. Lihat: Komandan Satuan Lapangan-A, Satuan Tugas Tribuana VIII, kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat-II, Kab. Baucau, "Permohonan Dukungan Obat Bulanan Pos Dan Kes Satlap-A," Maret 1999 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 14).
32. Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 94
33. Wiranto, dikutip dalam Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Indonesia tentang Hak Asasi di Timor Timur (Internal), Jakarta, Januari 2000, paragraf40.

34. Dokumen yang ditulis oleh Ian Martin, 1 Juni 2003. Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, Bab
35. Lihat: Komandan Komando Pasukan Aitarak Sektor B (Eurico Guterres) kepada Dandim 1627/Dili dan orang lainnya. Surat No. 46/PD/MK-AT/VI/199 tentang "Permohonan Dispensasi," 22 Juni 1999 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 31).
36. PBB, *Situation of Human Rights in East Timor*, 10 Desember 1999, hal. 12.
37. Pernyataan mantan anggota TNI Timor kepada Unit Kejahatan Berat. Dikutip di *Brief of support for arrest warrants for those indicted in the 'National Indictment'* (Laporan untuk dukungan atas surat penangkapan untuk mereka didakwa dalam "Dakwaan Nasional") hal. 58-59.
38. Pernyataan Uskup Carlos Ximenes Belo kepada Unit Kejahatan Berat. Dikutip di *Brief of support for arrest warrants for those indicted in the 'National Indictment'* (Laporan untuk dukungan atas surat penangkapan untuk mereka didakwa dalam "Dakwaan Nasional") hal. 59.
39. "KSAD Jelaskan Soal Sipil Dipersenjaitai," *Media Indonesia*, 2 Februari 1999.
40. Dikutip di ETISC, *Indonesia's Death Squads*, hal. 13.
41. "Crossbows and Guns in East Timor," *Economist*, vol. 350 no. 8106 (13 Februari 1999), hal. 40.
42. Kodim 1628/Baucau, "Daftar: Nominatif Anggota Kompi Khusus Pusaka, Kodim 1628/Baucau," 3 Februari 1999 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 9).
43. Kodim 1630/Viqueque, "Daftar: Nominatif Pemegang Senjata Team Makikit" tanpa tanggal, tetapi ditemukan di Kodim 1630/Viqueque tanggal 28 Oktober 1998 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 4).
44. Karen Polglaze, "Timor militia leader back in court (Pemimpin milisi kembali ke pengadilan)," *AAP*, 10 April 2000.
45. Pengadilan Distrik Dili, "Judgement (Keputusan)," Joni Marques dkk., p. 58.
46. Pengadilan Distrik Dili, "Judgement (Keputusan)," Joni Marques dkk., hal. 53.
47. Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan orang lainnya. Telegram Rahasia No. STR/44/1999, 13 April 1999 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 10).
48. Perwira Seksi Intelijen Kodim 1638 kepada Kepala Seksi Intelijen Korem 164/WD, Dan Sektor B, dan orang lainnya, "Laporan Harian Seksi Intelijen Dim 1638/Lqs Periode tgl. 16 s/d 17 April 1999," 18 April 1999 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 11).
49. Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi, Intel Rem 164/WD dan orang lainnya. Telegram Rahasia No. STR/202/ 1999, 18 April 1999 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 17).
50. Lihat Timor-Leste, Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat, Dakwaan terhadap Herman Sedyono, dkk. Dili, 7 April 2003, hal.12. Juga lihat pernyataan Pejabat Urusan Politik UNAMET.
51. Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR Bab 7 hal. 105.
52. Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 106-113
53. *Ibid.*
54. Lihat Tabel 2, Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR
55. Lihat Timor-Leste, Wakil Jaksa Agung urusan Kejahatan Berat, Dakwaan terhadap Wiranto dan orang lainnya ('Dakwaan Nasional!')
56. Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 129.
57. Beberapa anggaran seperti ini ada di arsip CAVR.
58. Lihat Laporan Robinson Bab 8 – Militias: Funding and Material Support (Milisi: Pendanaan dan Dukungan Material), *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR.
59. Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 125, 129.
60. Robinson, *East Timor 1999*, submisi OHCHR kepada CAVR, hal. 36.
61. Pernyataan Ian Martin kepada Unit Kejahatan Berat, *Ibid* hal. 54.
62. Pernyataan Stephen Polden kepada Unit Kejahatan Berat. Dikutip di *Brief in support of the application to the Special Panels of the Dili District Court for arrest warrants for those persons indicted in the 'National Indictment'* (Laporan yang mendukung permintaan kepada Pengadilan Distrik Dili untuk menangkap orang-orang yang didakwa sesuai dengan 'Dakwaan Nasional') hal. 54.
63. Lihat Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan lainnya. Telegram Rahasia No. TR/41/1999, 28 Januari 1999 (Koleksi Yayasan Hak, Dokumen No. 7)
64. *Ibid.*
65. Lihat: Wakil Danrem 164/WD (Kol. Mudjiono), kepada Dan Sektor A dan B, dan lainnya. Telegram Rahasia No. STR/43/1999, 12 April 1999 (Koleksi Yayasan, Dok No. 12).

66. Pernyataan Manuel Carrascalão yang diberikan kepada Unit Kejahatan Berat.
67. Pernyataan mantan pejabat UNAMET (nama dirahasiakan) kepada Unit Kejahatan berat, yang dikutip di "Brief in support of the 'National Indictment'" ibid, hal. 77.
68. Ross Coulthart, "Timor on the brink" *Sunday Programme*, Channel 9, Sydney, Australia. Ditayangkan Juni 1999.
69. Pernyataan yang diberikan kepada Unit Kejahatan Berat, yang dimasukkan dalam Laporan yang mendukung Dakwaan Nasional SCU, hal. 58
70. Brief in support. hal. 60
71. Brief in support. hal.84
72. Pernyataan yang diberikan kepada Unit Kejahatan Berat, yang dimasukkan dalam Brief in support of the 'National Indictment' (Laporan yang mendukung Dakwaan Nasional) SCU, hal. 40.
73. Ian Martin, kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.

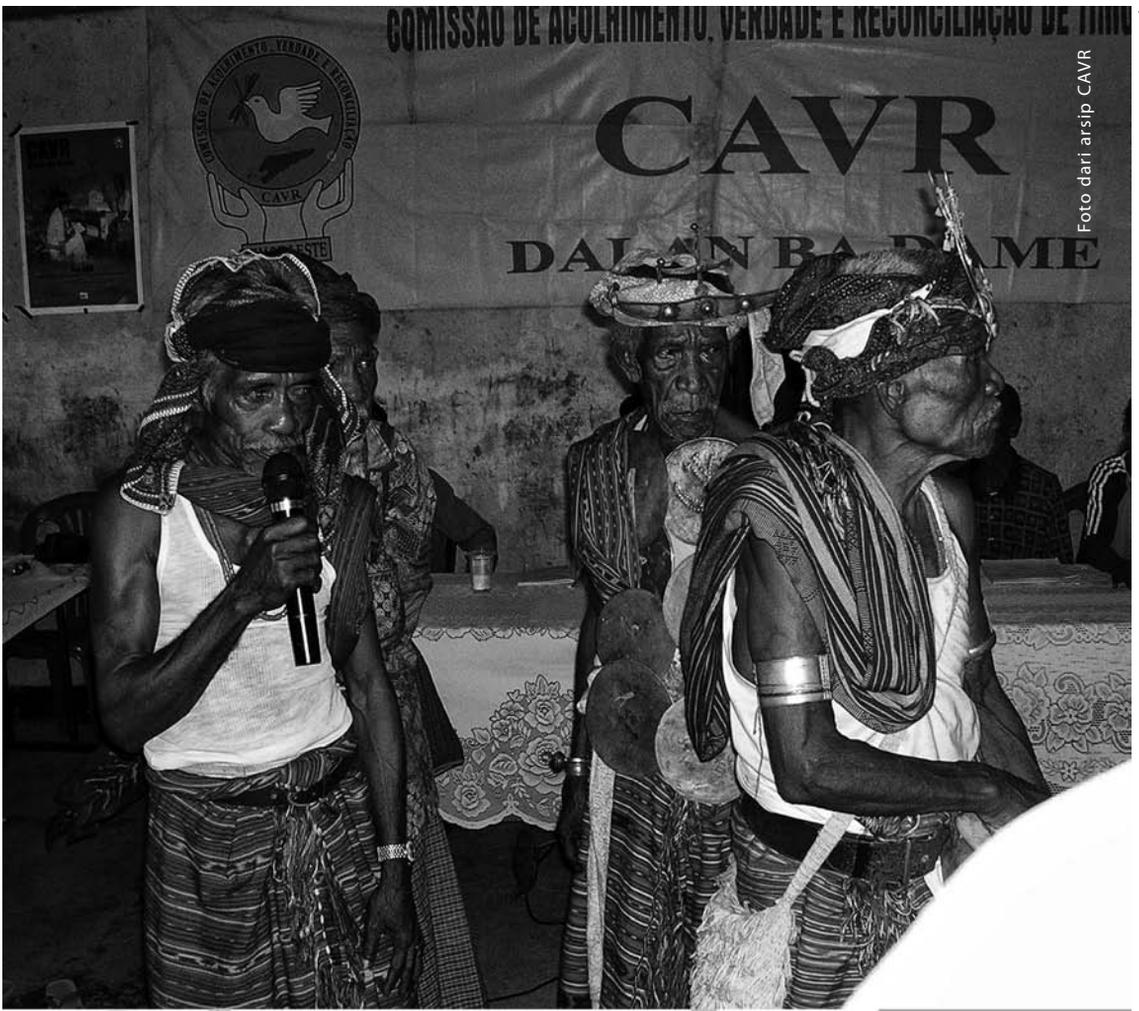


Foto dari arsip CAVR

Chega!

Bagian

9.

Rekonsiliasi komunitas

Bagian 9. Rekonsiliasi komunitas

2701 | Pendahuluan

2701 | Ulasan bab

2703 | Latar belakang

2703 | Situasi 1999

2705 | **Keadilan tradisional dalam masyarakat Timor-Leste**

2706 | **Boks: *Nahe biti boot***

2709 | Asal-usul proses Rekonsiliasi Komunitas

2709 | **Boks: Hasil konsultasi distrik**

2711 | Proses Rekonsiliasi Komunitas

2711 | **Boks: Ringkasan prosedur PRK**

2712 | Tujuan proses Rekonsiliasi Komunitas

2713 | Kerangka prosedural

2713 | Memulai proses

2713 | Menentukan apakah sebuah kasus sesuai untuk PRK

2715 | Persiapan dan penyelesaian sebuah pertemuan

2716 | Penghentian pertemuan PRK

2716 | Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas

2717 | Pengendalian PRK pada *lisan* (adat) dan hukum

2718 | Pelaksanaan program PRK

2718 | Staf

2718 | Jadwal

2719 | Tantangan awal

2720 | Keterlibatan masyarakat

2721 | Pertemuan PRK

2721 | **Boks: Prinsip-prinsip pertemuan PRK**

2721 | Tata letak pertemuan

2722 | Prosedur

2722 | **Pembukaan resmi pertemuan**

2722 | **Pidato-pidato**

2722 | **Doa bersama**

2722 | **Pembukaan pertemuan/kata sambutan dari Ketua Panel**

2723 | **Kesaksian deponen**

- 2723 | Pertanyaan klarifikasi dari Panel
- 2723 | Pertanyaan klarifikasi dari para korban yang namanya disebut
- 2723 | Pertanyaan klarifikasi dari anggota komunitas
- 2724 | Diskusi dengan tindakan rekonsiliasi dipimpin oleh Panel
- 2724 | Deklarasi tindakan rekonsiliasi
- 2724 | Permintaan maaf/sumpah dari para deponen
- 2724 | Penandatanganan Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas
- 2725 | Menutup pertemuan PRK

2725 | Boks: Pertemuan Proses Rekonsiliasi Komunitas Caicasa

2729 | Peranan *lisan* (adat) dalam pertemuan PRK

2729 | Menandai formalitas acara

2730 | *Lisan* dan regulasi

2731 | **Persamaan dan perbedaan praktik *lisan***

2732 | PRK tanpa *lisan*

2732 | Boks: Kasus V

2733 | **Kasus-kasus istimewa**

2733 | Boks: Kasus M

2734 | Boks: Pertemuan PRK di Lela Ufe, Oecussi, 22 November 2002

2736 | Hasil program PRK

2736 | Hasil umum

2738 | Variasi hasil antardistrik

2738 | **Pernyataan yang diterima**

2739 | **Yurisdiksi Kejaksaan Agung**

2740 | **Deponen tidak hadir**

2740 | Jumlah deponen dalam pertemuan PRK

2740 | Tindakan yang ditangani PRK

2740 | Tindakan Rekonsiliasi

2741 | Boks: Kekuatan permintaan maaf

2742 | Efektivitas program PRK

2743 | Mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam komunitasnya

2744 | Kekhawatiran mengenai rapuhnya rekonsiliasi

2744 | Memulihkan martabat korban

2745 | Menetapkan kebenaran tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia

2746 | Boks: Pertemuan PRK di Fahahebo, Liquiçá, 29 Oktober 2002

- 2744 | Mempromosikan rekonsiliasi
- 2749 | Pelajaran yang diperoleh
 - 2749 | Pelaksanaan program
 - 2749 | Peran korban
 - 2750 | Tindakan rekonsiliasi
 - 2750 | Hubungan antara Kejaksaan Agung dengan Komisi
 - 2751 | Hubungan antara PRK dengan pengadilan

..... 2751 | Dampak lebih luas program PRK

- 2751 | PRK sebagai simbol berakhirnya konflik
- 2752 | Sumbangan untuk upaya memberantas impunitas
 - 2753 | Ketidakmampuan mengadili orang-orang yang paling bertanggung jawab
- 2754 | Sumbangan PRK untuk penguatan kapasitas
- 2755 | PRK: Pendekatan keadilan yang unik

2756 | **Boks:** Pertemuan PRK di Holsa, Maliana, Bobonaro, 30 Juni 2003

..... 2758 | Refleksi

- 2758 | Kesimpulan
- 2759 | Pekerjaan yang tersisa
- 2761 | Masa depan PRK

Daftar tabel dan diagram:

- 2718 | **Tabel 1** : Jadwal kegiatan PRK dalam periode operasional tiga bulan di setiap subdistrik
- 2737 | **Tabel 2** : Hasil program PRK menurut distrik
- 2738 | **Diagram** : Hasil PRK

Rekonsiliasi Komunitas



Ya, dan para pelaku...harus menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf...masyarakat sudah bilang kepada saya untuk membawa mereka kembali. Kita akan hidup bersama, kita akan menghukum mereka dengan cara kita, kita akan menuntut dari mereka: "Oh, kalian yang membakar rumah ini. Bantu kami dan kita akan bersama-sama membangun."¹

Mantan Presiden CNRT, Kay Rala Xanana Gusmão 2001.

Pendahuluan

Ulasan bab

1. Salah satu fungsi utama Komisi adalah untuk memajukan rekonsiliasi di Timor-Leste. Tujuan ini melatarbelakangi rancangan seluruh program Komisi dan menentukan bagaimana program-program tersebut diterapkan. Komisi mengambil pendekatan yang terpadu dan menyeluruh dalam memajukan rekonsiliasi di Timor-Leste, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam kerjanya. Dalam mencapai tujuan rekonsiliasi, Komisi melakukan pendekatan dari berbagai sisi dengan serangkaian program yang dijalankan selama masa kerjanya. Telah disadari sejak dini bahwa agar benar-benar menjadi efektif, Komisi harus melibatkan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dari semua pihak dalam konflik, dengan menjangkau sampai tingkatan kepemimpinan nasional tertinggi dan melanjutkan hal ini pada tahun-tahun yang akan datang.
2. Inisiatif utama Komisi untuk memajukan rekonsiliasi di tingkat bawah masyarakat adalah program Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK). Program ini merupakan sebuah program baru dan belum pernah diuji sebelumnya untuk memajukan rekonsiliasi

dalam masyarakat. Ini dicapai dengan mengintegrasikan orang-orang yang terkucil dari komunitasnya sendiri karena mereka pernah melakukan pelanggaran 'kurang berat' yang terkait politik dalam konflik-konflik politik di Timor-Leste.² Program ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat Timor-Leste dan orang-orang yang telah merugikan mereka dengan melakukan pelanggaran ringan, siap melakukan rekonsiliasi bersama. Prosedur PRK berpijak pada keyakinan bahwa cara terbaik untuk mencapai rekonsiliasi komunitas ialah melalui mekanisme partisipatif di tingkat desa. Mekanisme ini menggabungkan praktik keadilan tradisional, arbitrase, mediasi, dan aspek hukum pidana serta perdata.

3. Oleh karena itu, Komisi diberi mandat berdasarkan Peraturan 10/2001² untuk menyelenggarakan pertemuan berbasis komunitas. Dalam pertemuan ini, para korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat luas bisa berpartisipasi secara langsung dalam mencari penyelesaian agar pelaku pelanggaran bisa diterima kembali oleh masyarakat. Peraturan ini mengatur langkah-langkah dasar yang harus dilakukan selama proses PRK tetapi tidak memerinci prosedur PRK, sehingga proses PRK bisa fleksibel dalam memanfaatkan unsur-unsur tradisi.

4. PRK merupakan proses sukarela. Pertemuan diselenggarakan di komunitas-komunitas yang terkena dampak oleh sebuah panel yang terdiri atas para pemuka masyarakat setempat dan diketuai oleh Komisaris Regional yang bertanggung jawab atas distrik di mana pertemuan tersebut diselenggarakan. Dalam pertemuan, pelaku diminta mengakui secara utuh keterlibatannya dalam konflik. Korban dan anggota komunitas yang lain kemudian diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan komentar atas pernyataan pelaku. Pertemuan kerap menjadi pengalaman yang sangat emosional bagi para peserta dan dapat berlangsung sehari penuh, bahkan sampai larut malam. Setelah semua pihak yang terkait selesai berbicara, panel membantu membuat kesepakatan di mana pelaku menerima sanksi tertentu. Sanksi ini bisa berupa kerja untuk komunitas atau pembayaran reparasi kepada korban. Setelah melakukan ini, pelaku baru bisa diterima kembali ke dalam komunitasnya. Unsur-unsur *lisan*[†] juga digunakan dalam PRK yang wujudnya berbeda-beda tergantung pada budaya setempat.

5. Sebelum suatu pertemuan dapat diselenggarakan, Kantor Kejaksaan Agung³ diminta meninjau kasus-kasus yang diajukan dan memberikan persetujuan agar kasus tersebut dapat ditangani melalui PRK dan bukannya melalui pengadilan. Setelah pertemuan, kesepakatan rekonsiliasi yang dibuat dapat disahkan menjadi Keputusan Pengadilan, setelah melalui proses pertimbangan hukum. Jika Pengadilan setuju dan pelaku melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disepakati, maka kepada pelaku bisa diberikan imunitas dari tuntutan hukum pidana atau perdata untuk kasus yang dimaksudkan.

.....
* Ketika PRK sedang dirancang, dilakukan konsultasi dengan masyarakat dan pada kesempatan ini anggota-anggota masyarakat menyampaikan perasaan bahwa mereka tidak bisa berekonsiliasi dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan berat seperti pembunuhan, perkosaan dan penyiksaan, sebelum dilakukan penuntutan dan pengadilan terhadap mereka.

† Dalam bahasa Indonesia, ini serupa dengan kata 'adat'.

6. Hasil program PRK menunjukkan bahwa PRK telah memberi kontribusi yang nyata kepada rekonsiliasi komunitas di Timor-Leste dan reintegrasi para pelaku kejahatan di masa lalu ke dalam komunitasnya masing-masing. Sebanyak 1.371 pelaku berhasil ditangani dalam proses PRK, lebih banyak dari target awal yang hanya 1.000 orang, dan sudah banyak orang yang meminta agar proses PRK ini dilanjutkan. Para pelaku, korban, dan peserta lainnya menyatakan kepada Komisi bahwa proses PRK telah sangat membantu dalam menciptakan perdamaian dan menyelesaikan perselisihan masa lalu di komunitas mereka. Mungkin indikator keberhasilan PRK yang paling nyata adalah terciptanya perdamaian dan stabilitas di Timor-Leste di masa awal yang sulit, meski ada yang meramalkan bahwa akan terjadi serangan balas dendam terhadap para pelaku kejahatan karena peran mereka dalam kekerasan 1999.

Latar belakang

Situasi 1999

7. Tingkat kekerasan dan kehancuran yang tinggi yang terjadi setelah Jajak Pendapat pada 30 Agustus 1999 menyebabkan terjadinya perpindahan internal sekitar 300.000 orang, sementara antara 250.000 dan 300.000 orang lagi secara sukarela melarikan diri atau dipaksa lari ke Timor Barat.⁴

8. Sekitar 180.000 pengungsi di Timor Barat sudah kembali ke Timor-Leste pada Oktober 1999.⁵ Banyak di antara pengungsi yang tetap tinggal di Indonesia adalah komandan milisi, orang Timor anggota TNI, pejabat sipil, dan politikus pro-otonomi yang ditengarai bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia pada 1999. Pasukan Internasional di Timor-Leste (Interfet) dan kemudian UNTAET menyatakan bahwa bila orang-orang yang dicurigai melakukan kejahatan berat kembali ke Timor-Leste, mereka akan ditangkap dan diadili.

9. Di antara pengungsi juga ada orang-orang yang berperan relatif kecil dalam kekerasan dan penghancuran. Ribuan orang Timor-Leste bergabung dengan kelompok milisi, termasuk banyak di antaranya yang dipaksa bergabung. Banyak yang ikut melakukan pembakaran rumah, pemukulan, intimidasi, dan penjarahan. Sebagian besar pengungsi adalah orang-orang yang tidak terlibat dalam tindak kekerasan, melainkan adalah anggota keluarga dari orang-orang yang melakukan tindak kejahatan atau orang-orang yang mendukung integrasi tetapi tidak terlibat melakukan kekerasan.

10. Dengan semakin banyaknya pengungsi yang kembali, semakin jelas bahwa sejumlah besar pelaku tindak kejahatan 'kurang berat' atau yang hanya mendukung integrasi, takut kembali ke komunitas mereka masing-masing. Kekerasan seputar pemungutan suara dilakukan di bawah perlindungan kuat TNI. Para korban samasekali tidak bisa menentang atau melawan. Diduga kuat bahwa jika ada kesempatan, para korban pasti akan melakukan tindakan balas dendam terhadap orang-orang yang pernah menyerang mereka dan keluarga mereka, atau bahkan terhadap orang-orang yang dulunya hanya prointegrasi.

11. Meski peristiwa seputar pemungutan suara masih sangat segar di dalam ingatan orang Timor-Leste pada akhir 1999, kekerasan yang terjadi tidak bisa dipisahkan dari sejarah konflik politik secara keseluruhan sejak 1974. Banyak yang masih berselisih akibat afiliasi politik mereka selama masa konflik internal 1975. Orang-orang yang menginginkan kemerdekaan selama masa pendudukan Indonesia masih menyimpan amarah dan rasa benci terhadap mereka yang bekerjasama dengan pasukan keamanan Indonesia; para pendukung kemerdekaan, keluarga, dan kerabat mereka telah menderita akibat kolaborasi itu. Penarikan pasukan Indonesia setelah pemungutan suara tampaknya akan membuka peluang bagi kekesalan yang telah berlangsung lama untuk meledak menjadi kekerasan.

12. Suasana tidak pasti dan ketakutan menghinggapi orang-orang yang berada di “pihak yang salah” selama 1999: mereka yang masih tinggal di kamp-kamp pengungsi di Timor Barat yang tidak mempunyai peran berarti selama konflik; mereka yang sudah kembali ke Timor-Leste tetapi berlingkup di kota-kota besar yang relatif dapat menyembunyikan identitas mereka; dan orang-orang yang sudah kembali ke desa mereka tetapi dikucilkan oleh masyarakat mereka.

13. Pada saat yang sama, perkembangan institusional memengaruhi pemikiran dan mempersempit pilihan mengenai keadilan dan rekonsiliasi. UNTAET mendirikan Panel Khusus di Pengadilan Distrik Dili, kantor Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat, dan Unit Investigasi Kejahatan Berat. Lembaga-lembaga ini, yang secara keseluruhan dikenal sebagai “proses peradilan kejahatan berat”, diberi mandat untuk menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan berat selama masa konflik. Mereka mendapat dana yang cukup besar dari PBB dan sebagian besar stafnya adalah staf internasional PBB.

14. Panel Khusus mempunyai wewenang atas tindak pidana berat kejahatan terhadap umat manusia, genosida, kejahatan perang, penyiksaan, pembunuhan, dan pelanggaran seksual.⁶ Mengenai tiga pelanggaran terakhir, ketentuan hukum menyatakan bahwa Panel Khusus memiliki yurisdiksi eksklusif atas kasus-kasus pembunuhan dan pelanggaran seksual yang terjadi di Timor-Leste antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999. Kejahatan terhadap umat manusia, kejahatan perang, genosida, dan penyiksaan secara internasional diakui sebagai kejahatan di bawah yurisdiksi universal, yang berarti bahwa secara teknis Panel Khusus bisa menangani kejahatan-kejahatan tersebut tanpa memandang kapan dan di mana terjadinya. Namun karena beban kerja yang berlebihan, suatu putusan kebijakan internal diambil oleh Unit Kejahatan Berat untuk membatasi hanya mengadili keenam pelanggaran tersebut yang terjadi pada 1999 dalam yurisdiksinya. Keputusan ini diambil karena banyaknya beban kasus yang muncul dari 1999, tetapi ini berarti bahwa kejahatan berat yang terjadi sebelum 1999 tidak tertangani.

15. Panel Kejahatan Biasa di Pengadilan Distrik Dili mempunyai wewenang tidak hanya untuk menangani tindak kejahatan baru, tetapi juga berbagai tindak kejahatan ‘kurang berat’ yang terjadi selama masa konflik politik. Para hakim, jaksa, dan pengacara Timor-Leste yang sebagian besar tidak punya pengalaman atau hanya punya sedikit pengalaman sebelum mereka menduduki jabatan mereka, bertanggung jawab atas proses Pidana Biasa.

16. Meski para profesional di bidang hukum ini, dan para petugas yang menjalankan administrasi pengadilan, telah melakukan tugas mereka sebaik mungkin, segera jelas bahwa sistem hukum formal yang baru terbentuk ini sangat terbebani oleh kasus-kasus baru yang muncul dan kasus-kasus berat di dalam lingkup mandat proses kejahatan berat. Hampir tidak ada kemungkinan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan 'kurang berat' yang sudah menumpuk. Impunitas total untuk pelanggaran-pelanggaran di masa lalu ini akan sangat menghambat upaya meningkatkan penghormatan pada kekuasaan hukum di negara baru ini. Hal ini mungkin juga akan mendorong timbulnya tindakan main hakim sendiri oleh anggota masyarakat dan penyerangan balas dendam yang dengan mudah bisa menyulut emosi penduduk serta menimbulkan gelombang kekerasan baru.

17. Dalam konteks ini, para pembuat kebijakan mulai mencari jalan keluar yang diharapkan tidak banyak memakan biaya dan tidak semakin membebani sektor peradilan formal. Solusi ini juga diharapkan mampu menangani sejumlah besar kasus dalam waktu yang relatif singkat, membantu mengintegrasikan kembali pelaku ke komunitas mereka, dan membantu memperkuat kedamaian yang masih rapuh.

18. Dalam keadaan tidak ada mekanisme formal apapun di tingkat desa, beberapa kelompok masyarakat mulai melakukan upaya memecahkan masalah melalui proses tradisional yang dipimpin oleh pemuka spiritual setempat. Proses Rekonsiliasi Komunitas adalah upaya untuk memanfaatkan praktik tradisional yang masih sangat dijunjung tinggi masyarakat ini dan menggabungkannya dengan prinsip hukum yang menjadi dasar keberadaan negara baru Timor-Leste. Mekanisme yang dihasilkan menggabungkan partisipasi langsung pemimpin lokal, pelaku, korban, dan anggota masyarakat dengan persyaratan formal yang melibatkan Kejaksaan Agung dan Pengadilan. Diharapkan kombinasi ini tidak hanya akan membantu mengintegrasikan pelaku ke dalam komunitas mereka, tetapi juga mengurangi beban sistem peradilan formal, turut membantu memerangi impunitas, dan membantu memupuskan rasa marah yang terpendam akibat konflik politik.

Keadilan tradisional dalam masyarakat Timor-Leste

19. Ketika para perancang proses PRK memutuskan untuk memasukkan hukum *lisan* ke dalam proses ini, mereka dapat mengambil banyak hal dari kekayaan tradisi budaya. Sistem hukum *lisan*, untuk menangani tindak pidana dan sengketa perdata, merupakan bagian dari tradisi. Tradisi ini sudah ada di Timor-Leste sebelum kedatangan Portugis pada abad ke-16. Baik Pemerintah Portugis maupun Indonesia hanya mengakui sistem peradilan formal yang mereka dirikan. Meskipun demikian, mekanisme sistem peradilan formal tidak terlalu berkembang di bawah kedua pemerintah itu dan hanya terpusat di Dili dan kota-kota lain. Metode tradisional tetap menjadi mekanisme efektif untuk menyelesaikan perselisihan bagi sebagian besar penduduk, terutama yang tinggal di perdesaan. Penggunaan prosedur *lisan* terus meningkat pada masa pendudukan Indonesia karena sistem peradilan formal dianggap sarana penindasan dan bukan alat untuk melindungi hak masyarakat.

20. Kepercayaan tradisional terus memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Timor-Leste. Masyarakat mengandalkan pada praktik-praktik penyelesaian konflik tradisional yang memungkinkan pihak korban untuk mencari penyelesaian melalui para tetua *lisan* yang dikenal dengan sebutan *lia nain* (pemimpin spiritual). Praktik ini mempertemukan kedua belah pihak, keluarga mereka, dan bahkan anggota masyarakat lainnya untuk mengikuti jalannya upacara untuk memecahkan masalah. Upacara biasanya berlangsung dengan kedua belah pihak duduk di atas tikar (*biti* dalam bahasa Tetun), yang karena itu diberi sebutan *nahe biti boot* (artinya: “menggelar tikar besar”) yang menggambarkan prosedur tradisional untuk menyelesaikan perselisihan. Menggelar tikar melambangkan awal proses pencarian kebenaran. Biasanya, tikar tidak boleh dilipat sebelum dicapai suatu penyelesaian.

21. Para peserta yakin bahwa arwah nenekmoyang mereka yang dipanggil pada awal upacara, menjadi saksi upacara *nahe biti boot* dan merestui upacara itu. Kehadiran mereka membuat upacara ini mengikat semua pihak yang terlibat dan dipercaya bahwa pihak yang tidak menerima keputusan yang dihasilkan akan menanggung konsekuensi yang berat.

22. Dalam sistem ini *lia nain* memainkan peran penting sebagai fasilitator dan hakim. Berbagai faktor memengaruhi jalannya proses peradilan tradisional; misalnya, seberapa berat kasusnya dan apakah perselisihan terjadi antarkeluarga atau di dalam satu keluarga. Faktor-faktor ini juga menentukan jumlah, kedudukan, dan status sosial pemimpin yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah.

23. Bentuk prosedur *lisan* berbeda-beda di setiap daerah. Namun, meski ada perbedaan ini, prosedur dasar *nahe biti boot* sama di seluruh pelosok Timor-Leste.

Nahe biti boot

Upacara *nahe biti boot* umumnya terjadi sebagai berikut:

Lia nain, mengenakan kain tenun *tais*[†] (tenunan tradisional) warna-warni, memakai gelang kaki dari rambut kuda, berhiaskan perlengkapan upacara *kaibauk* (seperti tanduk terbuat dari perak), dan mengenakan perhiasan dada yang dikenal dengan sebutan *belak*, membuka upacara dengan menari sambil menyanyi dan mengucapkan mantra-mantra yang akan dijawab oleh yang hadir. Kemudian tikar digelar secara khidmat. Ini menandai awal dari

* *Lia nain* (arti harfiah: pemilik kata-kata) dianggap sebagai pemegang keputusan hukum.

† *Tais* adalah kain yang ditunen tangan secara tradisional dengan lambang-lambang dan pola-pola yang khas menurut klan penenunnya.

upacara dan mengisyaratkan bahwa kedua belah pihak yang berseteru setuju duduk bersama untuk memecahkan perselisihan. Tikar tidak boleh dilipat sebelum perselisihan diselesaikan. Upacara ini biasanya dimulai pada pagi hari dan, bergantung pada berat atau rumitnya persoalan, dapat berlangsung sampai larut malam di hari berikutnya.

Setelah tikar digelar, dikeluarkan sebuah bakul terbuat dari rumput yang dianyam (*mama fatin*) yang berisi buah pinang (*bua malus*), kapur, daun sirih, tembakau, tuak, dan benda-benda lainnya. Pihak-pihak yang bersengketa dan *lia nain* akan mengunyah *bua malus*, daun sirih, dan kapur, serta minum tuak setelah sengketa diselesaikan secara baik, sebagai tanda persahabatan dan isyarat bahwa konflik telah selesai dan memperlihatkan di depan umum bahwa kedua belah pihak sekarang kembali berhubungan secara damai satu sama lain.

“*Lulik* adalah semua yang disucikan...kebijakan dan praktik *lisan*... bukan hanya benda-benda keramat. *Lia nain* membawa benda-benda keramat seperti tongkat (*rota*) atau keris melambangkan kehadiran *lisan*, oleh karena itu pihak-pihak yang bersengketa harus tunduk pada hukum *lisan*.” – Pastor Jovito Araújo, Wakil Ketua CAVR.⁷

Setelah upacara selesai, pihak-pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk menyampaikan kasus mereka kepada para hadirin. Biasanya mereka dipersilakan menceritakan versi mereka mengenai kejadian-kejadian yang berhubungan dengan perselisihan yang sedang ditangani. Sesudah itu, para penengah atau peserta lain bisa mengajukan pertanyaan kepada mereka. Pada saat tertentu, *lia nain* atau warga masyarakat yang hadir bisa menghentikan tahap ini dan mengumumkan bahwa waktunya tiba untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penentuan hukuman.

Jika pihak yang menuntut bisa meyakinkan *lia nain* bahwa pihaknyalah yang benar, maka keputusannya adalah hukuman untuk pelaku atau pembayaran ganti rugi kepada korban atau keduanya. Meski hasil seperti itu bisa mengandung dimensi retributif, tetapi ini diputuskan melalui suatu proses peradilan yang melibatkan diskusi dan debat dengan semua pihak. Ini berbeda sekali dengan sistem peradilan formal, di mana hukuman ditentukan oleh negara setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh ahli hukum yang mewakili pihak penuntut dan terdakwa.

Hukuman yang diberikan melalui proses *lisan* bisa berupa dua macam, hukuman sosial atau fisik.⁸ Hukuman sosial termasuk dikucilkan

* Menurut tradisi, *mama fatin* melambangkan keramahan.

dari kehidupan masyarakat atau diturunkan status sosialnya. Pada masa lalu, hukuman fisik bisa berupa kurungan atau hukuman mati. Namun demikian, pelaku bisa menghindari hukuman dengan membayar ganti rugi dalam jumlah tertentu kepada korban atau keluarga korban. Jika pelaku tidak mau atau tidak bisa membayar ganti rugi yang telah disepakati, keluarga pelaku bisa ikut memikul tanggung jawab atas “hukuman” atau “denda” tersebut.

Ciri utama sistem *lisan* adalah keterlibatan masyarakat luas dalam diskusi mengenai perselisihan dan bagaimana menyelesaikannya. Jika seseorang menjadi korban kejahatan, kerabatnya juga akan ikut merasakan ketidakadilan. Karena itu, meski upacara-upacara *lisan* berfokus pada individu, ia tetap memasukkan kepentingan kelompok-kelompok keluarga. Dalam mencapai kesepakatan atau menetapkan sanksi, hubungan antarkeluarga dan antarkelompok masyarakat selalu dipertimbangkan. Pendekatan keadilan yang inklusif ini, yang berdasar pada kepercayaan bahwa setiap orang merupakan bagian dari keluarga dan masyarakatnya, terbukti menjadi motivasi kuat bagi penduduk untuk melakukan rekonsiliasi.⁹

Karena konteks kemasyarakatannya yang luas ini, penyelenggaraan rekonsiliasi melalui upacara dan ritual *lisan* secara terbuka merupakan bagian penting dalam upaya membangun kembali atau mempertahankan stabilitas sosial. Meski praktik dan ritual *lisan* berbeda-beda di berbagai tempat, ada beberapa prinsip yang umum. Pertama, sama halnya dengan sebagian besar aspek dari praktik *lisan* lainnya, arwah nenek moyang dipanggil untuk menjadi saksi sekaligus merestui proses rekonsiliasi. Kedua, pelaku (dan kadang-kadang keluarga korban) menyumbang barang-barang untuk keperluan upacara *lisan*. Sumbangan ini biasanya berupa buah pinang dan tuak yang dikonsumsi bersama dalam penutupan upacara—melambangkan penyatuan kembali. Tidak jarang binatang korban juga dibawa ke pertemuan ini. Binatang korban dapat memainkan berbagai peran, tetapi biasanya ususnya digunakan untuk menentukan apakah prosesnya sudah selesai dan direstui oleh nenek moyang. Ketiga, biasanya upacara ini diikuti dengan makan bersama. Hal ini untuk memperkuat kesepakatan yang memungkinkan ditutupnya perselisihan yang selanjutnya memulihkan keselarasan dan kesatuan sosial.

Asal-usul Proses Rekonsiliasi Komunitas

24. Pada Mei 2000 Unit Hak Asasi Manusia UNTAET menyelenggarakan suatu lokakarya yang dipimpin oleh dua pakar internasional, mengenai kemungkinan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Timor-Leste. Laporan lokakarya ini mencakup suatu rekomendasi tentang perlunya pemecahan yang praktis dan berbasis masyarakat untuk menangani pelaku tindak kejahatan kurang berat, terutama yang dilakukan dalam kurun waktu seputar Jajak Pendapat 1999.¹⁰

25. Pada Agustus 2000, CNRT, termasuk wakil partai-partai politik dan kelompok-kelompok lain Timor-Leste yang mendukung suatu referendum, menyelenggarakan kongres nasional dan secara bulat mengesahkan resolusi tentang pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Usulan mengenai Proposal ini diajukan kepada Dewan Nasional, yaitu dewan konsultasi legislatif Timor-Leste yang dibentuk oleh UNTAET dan permintaan bantuan pun diajukan kepada UNTAET. Administrator Transisi, Sergio Vieira de Mello, meminta Bagian Hak Asasi Manusia UNTAET membantu lembaga-lembaga mitranya di Timor-Leste melakukan penelitian awal dan mengambil langkah-langkah pembentukan suatu 'komisi kebenaran dan rekonsiliasi'. Komite Pengarah kemudian dibentuk, terdiri atas wakil-wakil CNRT, organisasi nonpemerintah hak asasi manusia, kelompok-kelompok perempuan, organisasi-organisasi pemuda, Gereja Katolik, Asosiasi Mantan Tahanan Politik (Assepol), Falintil, UNTAET (melalui bagian hukum dan hak asasi manusia), dan UNHCR.

26. Konsep proses rekonsiliasi komunitas dirumuskan selama proses konsultasi yang dilakukan oleh Komite Pengarah antara September 2000 dan Januari 2001. Konsultasi ini dilakukan di banyak tempat, meliputi semua distrik, dengan pertemuan diselenggarakan di tingkat dusun, desa, subdistrik, dan distrik. Konsultasi juga dilakukan dengan kelompok-kelompok politik dan hak asasi manusia yang utama. Dalam pertemuan-pertemuan masyarakat, para peserta diminta mengemukakan pandangan mereka mengenai cara menangani "kejahatan kurang berat" melalui pertemuan berbasis masyarakat dan bukan melalui pengadilan.

Hasil Konsultasi Distrik

Pandangan masyarakat mengenai Rekonsiliasi

Berikut adalah sebagian pandangan umum masyarakat mengenai proses rekonsiliasi :

- Prosesnya harus berbasis masyarakat dan pelaku diharuskan menceritakan secara jujur mengenai pelanggaran pelaku kepada para korban dan orang-orang yang mereka kenal.

- Proses rekonsiliasi harus dilakukan di tingkat desa. Para peserta menyatakan kekecewaan mereka karena inisiatif rekonsiliasi sampai saat itu berpusat pada para pemimpin. Meski mereka mengakui bahwa para pemimpin juga perlu rekonsiliasi, mereka memandang perlu adanya mekanisme formal untuk menyelesaikan perbedaan di tingkat bawah, yang muncul karena konflik di masa lalu.
- Sangat tidak masuk akal kalau pemimpin nasional semata-mata menyuruh masyarakat melakukan rekonsiliasi. Perlu ada sebuah forum di mana pelaku pelanggaran di masyarakat dapat menjelaskan tindakan mereka dan meminta maaf kepada masyarakat.
- Selain korban dan masyarakat, para *liurai* (kepala desa), pemimpin spiritual, dan tokoh-tokoh lain yang dihormati masyarakat perlu dilibatkan dalam proses rekonsiliasi.
- Mekanisme apapun yang digunakan harus melibatkan prosedur penyelesaian konflik secara *lisan*, tetapi *lisan* saja tidak cukup. Diperlukan sebuah pendekatan yang bisa mengaitkan mekanisme tradisional dengan sistem peradilan formal.
- Kenyataan bahwa bagian terbesar masyarakat Timor-Leste beragama Katolik harus diakui dan diintegrasikan ke dalam rancangan proses, terutama bagian keyakinan mereka pada ajaran Katolik mengenai pengakuan dan pengampunan dosa.
- Kemarahan terhadap orang-orang yang telah bekerjasama dengan pasukan pendudukan Indonesia, terutama terhadap orang-orang yang bergabung dengan kelompok milisi, masih kuat di kalangan masyarakat. Perlu dilakukan tindakan nyata untuk mengurangi rasa marah ini.
- Banyak pelaku 'kejahatan kurang berat' belum kembali ke desa asal mereka, melainkan tinggal di Dili atau tempat-tempat lain di mana mereka tidak dikenal. Mereka harus kembali ke desa masing-masing dan menjelaskan tindakan mereka kepada masyarakat di desanya.
- Para pendukung pro-otonomi mengemukakan perlunya pendidikan kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa

* Struktur sosial tradisional di seluruh Timor-Leste berdasar pada "raja-raja" yang dikenal dengan sebutan *liurai*. Sebelum kedatangan Portugis, Timor-Leste terdiri atas banyak kerajaan kecil di bawah kekuasaan turun-temurun seorang *liurai*. Sistem *liurai* dan institusi *lisan* lainnya kuat pengaruhnya di Timor-Leste, khususnya di daerah perdesaan. Namun, kita juga mengetahui bahwa sistem tradisional ini telah dikacau-balaukan dan dipecah-pecah oleh penjajahan dan peperangan. Misalnya, setelah pemberontakan Dom Boaventura 1911-1912 yang merupakan pemberontakan paling besar yang dipimpin oleh *liurai* menentang penguasa Portugis pada zaman penjajahan, pemerintah Portugis mengharuskan semua *liurai* mendapatkan persetujuannya sebelum menduduki jabatan. Dengan berjalannya waktu, Portugis memecah kekuasaan *liurai* dan menjadikan *suco* (kepangeranan) dan bukannya *reino* (kerajaan) sebagai dasar kesatuan politik pribumi.

mendukung tujuan politik pro-otonomi bukanlah tindak kejahatan dan bahwa para pendukung pro-otonomi tidak boleh dihukum karena pandangan politik mereka.

- Jika program formal jadi dilaksanakan, program ini harus didukung dengan kegiatan penyuluhan yang menyeluruh sampai ke tingkat desa.

Berikut adalah sebagian kekhawatiran umum yang muncul mengenai Komisi:

- Ada risiko bahwa pertemuan rekonsiliasi bisa membuka luka lama, terutama jika penyelidikan Komisi tidak terbatas pada kekerasan yang terjadi pada 1999 tetapi juga kekerasan mulai 1974. Karena alasan yang sama, beberapa pihak menginginkan agar kegiatan Komisi harus dibatasi hanya pada rekonsiliasi dan samasekali tidak memasukkan pencarian kebenaran.
- Komisi secara logistik tidak bisa menangani semua pertemuan rekonsiliasi yang kadang dilakukan di desa-desa terpencil, karena sulitnya medan dan terbatasnya transportasi serta sistem komunikasi.

27. Setelah melakukan konsultasi distrik, Komite Pengarah menyusun rancangan undang-undang. Setelah dilakukan diskusi selama beberapa bulan, Dewan Nasional mengesahkan Peraturan 10/2001 pada 13 Juni 2001. Administrator Transisi mengumumkan berlakunya Peraturan ini pada 13 Juli 2001.

Proses Rekonsiliasi Komunitas

Ringkasan Prosedur PRK

Menurut mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan 10/2001, para pelaku “tindakan-tindakan yang merugikan”, baik itu tindakan kriminal atau yang lainnya, secara sukarela dapat memberikan pernyataan kepada CAVR, berisi gambaran lengkap mengenai tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan, pengakuan tanggung jawab, dan fakta lain yang relevan. Pernyataan tersebut kemudian akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung, untuk memutuskan apakah akan menerapkan

yurisdiksi Kejaksaan Agung untuk penuntutan, atau apakah kasus yang bersangkutan layak diselesaikan melalui PRK. Jika disetujui untuk PRK, kasus tersebut kemudian dikembalikan kepada Komisi, yang harus menyiapkan sebuah pertemuan di dalam komunitas tempat tinggal pelaku.

Pertemuan dipimpin oleh sebuah panel yang terdiri atas tiga sampai lima pemimpin setempat, termasuk seorang Komisariss Regional CAVR yang bertindak sebagai ketua. Dalam pertemuan ini, pelaku diharuskan membuat pengakuan resmi di depan umum dan dapat diberi pertanyaan-pertanyaan oleh para korban dan anggota-anggota komunitas. Prosedur-prosedur tradisional *lisan* dan partisipasi pemuka-pemuka spiritual tergabung dalam proses ini, sesuai dengan *lisan* setempat. Setelah mendengar dari semua pihak, panel akan memutuskan ‘tindakan rekonsiliasi’ yang sesuai yang harus dijalankan oleh pelaku agar bisa diterima kembali ke dalam komunitas. Tindakan ini dapat mencakup kerja untuk komunitas, sebuah permintaan maaf, atau pembayaran ganti rugi. Jika pelaku menerima keputusan panel, sebuah persetujuan akan disusun dengan sederhana. Persetujuan itu kemudian akan didaftarkan ke Pengadilan Distrik yang sesuai, yang akan mengukuhkannya menjadi Keputusan Pengadilan. Setelah menyelesaikan semua ‘tindakan rekonsiliasi’ yang diwajibkan, pelaku secara otomatis berhak atas kekebalan perdata dan pidana untuk semua tindakan yang tercakup dalam persetujuan.

Tujuan Proses Rekonsiliasi Komunitas

28. Bagian IV dari Peraturan 10/2001 berjudul Prosedur Rekonsiliasi Komunitas, menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan sebuah Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK). Tujuan umum PRK, seperti yang disebutkan dalam Peraturan, adalah:

[Untuk] membantu penerimaan dan reintegrasi orang-orang ke dalam komunitas mereka...sehubungan dengan tindakan-tindakan kriminal dan non-kriminal yang dilakukan dalam konteks konflik politik di Timor-Leste antara 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999.¹¹

29. Prosedur-prosedur yang disebutkan dalam Peraturan memasukkan prinsip-prinsip yang diambil dari hukum pidana, hukum perdata, dan mekanisme tradisional untuk menyelesaikan perselisihan.

Kerangka prosedural

30. Kerangka prosedural PRK mencakup lima langkah sebagai berikut:

Memulai proses

31. Siapapun yang telah melakukan suatu “tindakan kriminal atau non-kriminal... di dalam konteks konflik politik di Timor-Leste”, yang telah mengakibatkan orang itu dikucilkan di dalam komunitasnya, dapat datang kepada Komisi untuk memberikan pernyataan.

32. Pernyataan ini harus mencakup:

- Uraian lengkap mengenai tindakan-tindakan yang terkait
- Pengakuan tanggung jawab
- Identifikasi mengenai hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan konflik politik
- Identifikasi orang-orang lain yang terlibat dalam tindakan-tindakan tersebut, sebagai pelaku-pelaku dan korban-korban lainnya
- Pernyataan penolakan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik
- Permintaan resmi untuk berpartisipasi dalam sebuah PRK di dalam komunitas yang tertentu

33. Sebelum menerima pernyataan, Komisi memberitahu deponen bahwa pernyataan tersebut akan dikirimkan ke Kejaksaan Agung, yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas semua jenis kejahatan berat, dan bahwa Kejaksaan Agung bisa menggunakan pernyataan tersebut dalam proses hukum di masa mendatang.¹² Staf Divisi PRK kemudian akan menyerahkan pernyataan yang telah lengkap kepada kantor nasional Komisi.

Menentukan apakah sebuah kasus sesuai untuk PRK

34. PRK tidak dimaksudkan untuk mengambilalih sebagian yurisdiksi Unit Kejahatan Berat atau Panel Khusus. Tetapi, PRK adalah mekanisme yang dirancang untuk menangani ‘kejahatan kurang berat’ dan untuk berjalan bersamaan dengan proses kejahatan berat. Ini sesuai dengan prinsip bahwa tidak bisa ada rekonsiliasi tanpa keadilan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan berat. Pada saat yang sama, prosedur tersebut menyadari ketidakmampuan sistem peradilan formal untuk menangani pelanggaran-pelanggaran ‘kurang berat’ dan kebutuhan untuk memberikan solusi seiring dengan memajukan rekonsiliasi. Pendekatan ini ditegaskan oleh Lampiran 1 Regulasi:

Pada prinsipnya pelanggaran-pelanggaran kriminal berat, terutama pembunuhan, penyiksaan, dan pelanggaran seksual, tidak boleh ditangani dalam Prosedur Rekonsiliasi Komunitas.¹³

35. Berdasarkan Regulasi ini, Kejaksaan Agung membuat keputusan apakah suatu kasus dapat ditangani dalam PRK, setelah dilakukan penilaian pendahuluan oleh komite pernyataan internal Komisi. Komite pernyataan memeriksa apakah kasus bersangkutan sesuai dengan mandat Komisi dan membuat penilaian awal mengenai kesesuaian kasus untuk ditangani dalam PRK. Penilaian ini, bersama sebuah salinan pernyataan tersebut, kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mempertimbangkan tindakan-tindakan yang diakui deponen dalam pernyataan dan memeriksa nama deponen dan kejadian-kejadian yang diuraikan dalam pernyataannya serta mencocokkannya dengan informasi dalam berkas-berkas Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung kemudian memutuskan apakah akan menerapkan yurisdiksi eksklusifnya untuk menyelidiki kasus tersebut dengan melihat kemungkinan adanya penuntutan. Jika Komite Pernyataan menyetujui pernyataan tersebut dan Kejaksaan Agung memutuskan untuk tidak menerapkan yurisdiksi, PRK dapat dilangsungkan.

36. Lampiran 1 pada Regulasi menetapkan garis besar, alih-alih aturan yang ketat, untuk Kejaksaan Agung dalam membuat keputusan ini.¹⁴ Kriteria untuk pertimbangan mencakup sifat kejahatan yang dilakukan oleh deponen, jumlah kejahatan yang dilakukan, dan peran deponen (apakah mengorganisasi, merencanakan, mendorong, atau memerintahkan kejahatan itu, atau mengikuti perintah orang lain). Contoh-contoh tindakan yang sesuai untuk ditangani PRK adalah “pencurian, penyerangan ringan, pembakaran, pembunuhan ternak, atau perusakan tanaman pangan”. PRK juga dapat menangani tindakan-tindakan non-kriminal yang dianggap telah membahayakan komunitas, seperti kolaborasi atau memberikan informasi secara rahasia, yang dianggap menimbulkan kerugian pada komunitas. PRK tidak dirancang untuk menangani tindakan-tindakan kriminal yang tidak berkaitan dengan konflik politik di Timor-Leste.

37. Dengan memberi wewenang kepada Kejaksaan Agung untuk memutuskan tentang kelayakan, Regulasi ini mengakui bahwa persyaratan keadilan itu sangat penting dan tidak boleh ditempatkan lebih rendah daripada kepentingan rekonsiliasi. Keputusan semacam ini lebih layak dibuat oleh para profesional hukum dengan pengetahuan mengenai kasus yang sedang diselidiki, bukan oleh staf CAVR. Keputusan mengenai apakah cukup bukti untuk menuntut seseorang atas kejahatan tertentu memerlukan pertimbangan apakah menurut hukum bukti tersebut mendukung unsur-unsur kejahatan yang bersangkutan. Keputusan semacam itu melibatkan konsep hukum yang rumit seperti ‘tujuan yang sama’, ‘bersekongkol’, dan ‘membantu terjadinya kejahatan sebelum atau sesudah kejadian’. Selain itu, satu-satunya bukti yang tersedia untuk Komisi adalah pernyataan sukarela yang relatif dangkal yang diberikan oleh deponen.

38. Dengan mencantumkan garis besar alih-alih daftar pelanggaran yang lengkap, diakui bahwa walaupun mungkin lebih diinginkan untuk menyusun daftar lengkap seperti itu, sebenarnya hal tersebut akan membatasi Kejaksaan Agung untuk menggunakan wewenangnya dan membuat keputusan secara kasus per kasus.

39. Kejaksaan Agung mempunyai waktu 14 hari untuk membuat keputusan, walaupun dapat meminta perpanjangan selama 14 hari.¹⁵ Regulasi memperbolehkan Komisi menyelenggarakan PRK jika Kejaksaan Agung tidak mengirimkan pemberitahuan bahwa mereka akan menerapkan yurisdiksi atas kasus tersebut dalam waktu dua minggu setelah menerima pernyataan.

40. Dalam memberitahu Komisi mengenai keputusannya, Kejaksaan Agung menggunakan salah satu dari dua surat standar. Satu surat digunakan jika Kejaksaan Agung bermaksud menahan kasus yang bersangkutan, dan dengan demikian menerapkan yurisdiksi atas “pelanggaran kriminal berat”. Surat tersebut mencantumkan kalimat berikut:

Orang-orang berikut ini sedang dalam penyelidikan oleh Unit Kejahatan Berat...Kejaksaan Agung menerapkan yurisdiksi eksklusifnya.¹⁶

41. Surat yang lainnya mengatakan bahwa kasus tersebut dapat ditangani oleh PRK, seperti berikut ini:

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan, orang-orang berikut ini mungkin telah terlibat dalam kejahatan berat yang merupakan bagian dari penyerangan yang luas dan sistematis. Meskipun demikian, karena jumlah kasus yang sedang dalam penyelidikan, Unit Kejahatan Berat tidak akan menyelidiki orang-orang berikut ini di masa mendatang; oleh karena itu, Komisi dapat melangsungkan proses rekonsiliasi.¹⁷

42. Seperti diperlihatkan oleh isi dari surat-surat tersebut, Kejaksaan Agung melalui proses ini tidak membuat keputusan apakah kasus tersebut menyangkut kejahatan berat atau tidak, tetapi dengan mempertimbangkan semua hal, hanya memutuskan apakah akan menjalankan yurisdiksinya untuk mengusut masalah tersebut.

Persiapan dan penyelesaian pertemuan

43. Jika Komisi mendapatkan kewenangan untuk menangani sebuah kasus melalui PRK, Komisi memberikan wewenang penyelenggaraan pertemuan komunitas kepada Komisaris Regional yang bertanggung jawab atas komunitas di mana pertemuan tersebut akan diadakan.¹⁸ Komisaris Regional bertanggung jawab membentuk Panel PRK yang akan memimpin pertemuan. Panel tersebut terdiri atas antara tiga sampai lima wakil komunitas, dengan Komisaris Regional berlaku sebagai ketua. Anggota-anggota panel dipilih melalui konsultasi antara Komisi (diwakili oleh Komisaris Regional) dengan komunitas. Di dalam Regulasi tidak ada ketentuan mengenai bagaimana pemilihan ini harus dilakukan atau kriteria apa yang harus digunakan untuk pemilihan, kecuali persyaratan “adanya keterwakilan gender yang baik di dalam panel”.¹⁹

44. Regulasi tersebut memberi keleluasaan kepada panel dalam menentukan prosedur mereka sendiri selama berlangsungnya pertemuan, tetapi mengharuskan mereka mendengarkan deponen, para korban, dan anggota-anggota komunitas lainnya yang dapat memberikan informasi yang relevan.²⁰ Panel dapat bertanya kepada deponen mengenai keterlibatan orang-orang lain dalam tindakan yang dilakukan, termasuk “identitas orang-orang yang mengorganisasi, merencanakan, mendorong, memerintahkan, atau berpartisipasi dalam tindakan-tindakan tersebut”.²¹ Panel juga dapat menentukan lingkup dan kedalaman dari pertanyaan jenis tertentu dan memerinci hal-hal yang dirasakan belum dikemukakan dengan memadai oleh deponen. Ada ketentuan untuk mengadakan pertemuan tertutup, jika dirasakan bahwa pengungkapan informasi tertentu dapat membahayakan deponen atau anggota komunitas lainnya, juga ada ketentuan tentang pemberian informasi dalam bentuk tertulis kepada panel.²²

Penghentian pertemuan PRK

45. Ketika PRK sudah dimulai, ada dua alasan yang dapat menanggukannya. Pertama, jika deponen menolak menjawab pertanyaan tanpa alasan yang sah (sebagaimana ditentukan oleh panel), pertemuan dapat dihentikan dan diserahkan kembali ke Kejaksaan Agung.²³ Kedua, jika ternyata ada bukti yang dapat dipercaya dalam pertemuan mengenai keterlibatan deponen dalam sebuah “kejahatan berat”, pertemuan akan dihentikan. Bukti ini kemudian harus dicatat dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung bersama pemberitahuan mengenai penangguhan ini.²⁴ Kejaksaan Agung diwajibkan segera menanggapi dengan menentukan kredibilitas bukti tersebut.

46. Jika Kejaksaan Agung menetapkan bahwa bukti yang diserahkan tersebut benar, Komisi harus menghentikan pertemuan dan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada deponen dan Kejaksaan Agung.²⁵ Jika Kejaksaan Agung merasa belum ada cukup bukti yang menunjukkan keterlibatan dalam sebuah kejahatan berat atau jika Kejaksaan Agung tidak memberitahu Komisi mengenai keputusannya dalam waktu 14 hari, Komisi memiliki wewenang untuk melanjutkan pertemuan bila hal ini dianggap sesuai dilakukan.

Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas

47. Setelah mendengar kesaksian dan pertanyaan-pertanyaan, Panel PRK bertanggung jawab menentukan tindakan rekonsiliasi “yang paling sesuai” untuk deponen. Pilihan-pilihannya adalah kerja untuk komunitas, ganti rugi, permintaan maaf di depan umum, atau “tindakan penyesalan lainnya”.²⁶ Panel tidak memiliki kuasa untuk memaksa deponen mematuhi keputusan-keputusannya, tetapi hanya dapat memberi rekomendasi untuk melakukan satu tindakan rekonsiliasi tertentu. Jika deponen setuju dengan tindakan yang direkomendasikan, Panel PRK kemudian menyusun suatu catatan resmi persetujuan yang disebut sebagai Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas (KRR). Jika deponen menolak melakukan tindakan rekonsiliasi yang ditentukan, CAVR diharuskan merujuk kasus tersebut kembali ke Kejaksaan Agung.

48. Dalam kasus-kasus KRK berhasil dibuat, CAVR memberikan salinan persetujuan tersebut kepada Pengadilan Distrik yang memiliki yurisdiksi atas komunitas di mana audiensi tersebut dilangsungkan. Pengadilan tersebut kemudian harus mendaftar KRK itu sebagai Keputusan Pengadilan, kecuali jika tindakan rekonsiliasi itu dianggap tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan atau jika tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setelah menyelesaikan semua tindakan rekonsiliasi yang diwajibkan yang terdaftar dalam persetujuan, deponen menerima pemberitahuan mengenai kekebalan hukumnya dari tanggung jawab pidana dan perdata atas semua tindakan merugikan yang telah diakui dan telah dimasukkan ke dalam KRK.²⁷

49. Regulasi tidak memberikan kewajiban hukum kepada para deponen untuk berpartisipasi dalam pertemuan PRK atau untuk membuat Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas. Namun, setelah suatu persetujuan ditandatangani, deponen punya tugas hukum untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kegagalan memenuhi kewajiban-kewajiban ini merupakan pelanggaran pidana yang hukumannya adalah kurungan penjara paling lama satu tahun, denda sampai USD3.000, atau keduanya.²⁸

Pengendalian PRK pada *lisan* (adat) dan hukum

50. Selama tahap perencanaan CAVR, beberapa orang mengungkapkan bahwa *lisan* sendiri sudah cukup untuk menangani 'kejahatan kurang berat' dan tidak diperlukan proses yang lebih formal. Meski demikian, pengalaman Komisi mengenai PRK telah membawanya pada kesimpulan bahwa prosedur campuran yang digunakan telah mampu memberi dimensi tersendiri yang tidak dapat diberikan oleh *lisan* saja atau keadilan formal saja.

51. Keberhasilan PRK dicapai berkat kombinasi faktor-faktor sebagai berikut: status Komisi sebagai lembaga pemerintah yang diakui, penggunaan prosedur-prosedur yang seragam dan basisnya dalam hukum, dan keterlibatan bukan hanya *lia nain* tetapi juga pemangku kepentingan yang lebih luas termasuk unsur Gereja Katolik, pemerintah lokal, dan masyarakat sipil. PRK juga mampu menangani kasus dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat, di semua subdistrik di seluruh wilayah; sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh mekanisme sistem peradilan formal ataupun mekanisme penyelesaian secara *lisan*.

52. Prosedur-prosedur *lisan* dikembangkan untuk membahas masing-masing kasus secara terpisah pada tingkat komunitas. Prosedur-prosedur ini tidak dirancang untuk menangani pelanggaran-pelanggaran dan "tindakan-tindakan merugikan" dalam skala besar yang terjadi selama konflik politik, terutama 1999. PRK lebih dirancang untuk menangani situasi yang abnormal ini, bukannya perselisihan sehari-hari yang biasa ditangani oleh *lisan*. Bahkan sejumlah pemuka masyarakat mengatakan bahwa PRK sebenarnya telah menghidupkan kembali *lisan*. Penghormatan yang diberikan masyarakat kepada PRK meluas ke kalangan pemuka masyarakat dan *lisan* yang berperan penting dalam upacara dan mediasi dalam pertemuan rekonsiliasi, sehingga mampu memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh manipulasi terhadap prosedur tradisional yang dilakukan oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia selama pendudukan.

53. PRK mampu menawarkan sebuah penyelesaian hukum untuk ‘kejahatan kurang berat’ yang berada di luar lingkup *lisan*. Peran Kejaksaan Agung dan pendaftaran setiap Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas yang berhasil menjadi Keputusan Pengadilan memberikan suatu formalitas tertentu bahwa para peserta dihargai dan dihormati. Selain itu, kekebalan dari penuntutan perdata atau pidana yang diberikan setelah dilaksanakannya “tindakan rekonsiliasi” yang disetujui, memberikan suatu finalitas yang berada di luar lingkup *lisan*.

Pelaksanaan Program PRK

Staf

54. Tanggung jawab mengenai program PRK dibagi antara kantor pusat dan staf lapangan yang bekerja di tingkat distrik. Pada puncaknya, divisi PRK pernah memiliki 47 staf. Di tingkat distrik, koordinasi program PRK dikerjakan oleh para koordinator distrik. Mereka memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan rekonsiliasi diselaraskan dengan tanggung jawab lain tim distrik. Staf distrik bekerjasama erat dengan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang program PRK dan mendorong para calon deponen, dengan menjelaskan prosesnya, mengeksplorasi setiap manfaat dan kerugian yang bisa terjadi dari partisipasi mereka, dan membantu mereka menulis pernyataan.

Jadwal

55. Menurut rencana strategis CAVR, setiap tim distrik akan menghabiskan tiga bulan untuk bekerja di setiap subdistrik yang ada di distriknya. Setiap tim beranggotakan staf yang mengerjakan program PRK dan yang mengerjakan kegiatan pencarian kebenaran, dukungan korban dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tim-tim ini beroperasi antara Juli 2002 dan Maret 2004. (Untuk informasi lebih lanjut tentang Rencana Strategis Komisi, baca Bab 1: Pendahuluan.)

56. Program PRK bertujuan menyelesaikan kegiatannya di setiap subdistrik sesuai dengan jadwal berikut ini.

| Penyuluhan/ Sosialisasi | Pengambilan Pernyataan Awal | Pemrosesan dan Persetujuan Pernyataan di Kantor Nasional & Kejaksaan Agung* | Persiapan Pertemuan Prk | Penyelenggaraan Pertemuan PRK |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Bulan 1 | | Bulan 2 | Bulan 3 | |

* Menurut hukum, Kejaksaan Agung memiliki waktu 14 hari untuk memeriksa pernyataan dan hak untuk meminta tambahan waktu 14 hari lagi bila diperlukan. Permintaan ini menjadi praktik yang standar.

Tantangan awal

57. PRK adalah sebuah konsep yang belum pernah diuji dan tidak dikenal, baik di Timor-Leste maupun di dunia internasional, maka tidak mengherankan apabila timbul masalah-masalah baru. Pada akhir dari fase tiga bulan pertama, yakni November 2002, menjadi jelas bahwa sebagian besar komunitas belum cukup yakin atau tertarik pada PRK untuk ikut terlibat di dalamnya. Secara khusus, para calon deponen tidak muncul ke permukaan dan memberikan pernyataan: di 13 subdistrik yang dicakup oleh tim-tim PRK dalam fase tersebut, hanya 143 pernyataan yang terkumpul dan hanya terlaksana enam pertemuan PRK, yang melibatkan 50 deponen.

58. Para anggota staf melaporkan bahwa permulaan lamban program ini adalah karena masyarakat belum paham apa yang dimaksud dengan PRK dan bagaimana cara kerjanya. Penjelasan lisan cukup membantu, namun sulit menggali dukungan yang cukup untuk sebuah konsep yang belum pernah dialami oleh mereka. Muncul juga kebingungan tentang perbedaan antara pernyataan yang diberikan untuk pencarian fakta dan pernyataan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk PRK. Selain itu, hubungan antara CAVR dan sistem hukum formal bagi kebanyakan orang tidak jelas. Banyak yang berkata bahwa satu-satunya informasi yang mereka terima tentang hal-hal yang berhubungan dengan keadilan bagi pelanggaran besar-besaran yang telah terjadi berasal dari kegiatan penyuluhan CAVR.

59. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, tim PRK meminta para pemimpin setempat mendorong anggota komunitasnya berpartisipasi. Sebuah film tentang pertemuan PRK diproduksi dan ditayangkan kepada masyarakat desa. Walaupun demikian, dorongan paling besar untuk terlibat dalam PRK berasal dari pengalaman langsung mengikuti pertemuan yang sebenarnya. Berita tentang pertemuan yang sukses menyebar dengan cepat dan luas. Ketakutan awal bahwa masyarakat tidak akan berpartisipasi mulai pupus dengan tersebarnya berita tentang semakin banyaknya pertemuan yang dapat diselesaikan dan meyakinkan makin banyak komunitas bahwa mereka juga harus mengadakan pertemuan.

60. Karena Komisi harus dapat mencakup seluruh wilayah negara dalam jadwal waktu operasionalnya, tidak mungkin memperpanjang waktu di setiap subdistrik menjadi lebih daripada tiga bulan. Walaupun demikian, PRK bisa dilaksanakan setelah beberapa langkah dasar telah diselesaikan—pertemuan penyuluhan masyarakat, pengumpulan pernyataan deponen, dan proses persetujuan Kejaksaan Agung. Langkah-langkah ini memakan banyak dari waktu tiga bulan yang disediakan. Akibatnya, di beberapa subdistrik, pertemuan dilakukan di akhir periode tiga bulan tersebut. Pertemuan yang sukses kemudian mendorong permintaan untuk pertemuan lainnya, namun sayangnya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah waktunya untuk melanjutkan ke subdistrik selanjutnya.

.....
Karena itu, waktu yang diperlukan untuk memproses (termasuk mengirimkan pernyataan ke dan dari distrik dan proses pemeriksaan CAVR sendiri) sering melampaui bulan yang disebutkan di sini.

Keterlibatan masyarakat

61. Sangatlah penting memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang PRK jika diinginkan agar para calon deponen, pemuka setempat, dan masyarakat luas melibatkan diri mereka dalam proses sampai pada tingkat mereka merasa memilikinya. Salah satu aspek dari hal tersebut adalah mereka tidak hanya mengadakan pertemuan saja, namun juga terlibat dalam perencanaannya. Regulasi telah menetapkan unsur-unsur dasar PRK, tetapi ia juga memberikan banyak keleluasaan kepada masyarakat lokal untuk menentukan karakter yang tepat yang sesuai dengan *lisan* setempat.

62. Masyarakat setempat juga bisa memberikan informasi kepada tim distrik tentang lingkungannya dan membantu tim tersebut mengidentifikasi desa mana yang bisa ditangani secara tepat melalui PRK, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti dampak yang ditimbulkan oleh konflik pada desa-desa tertentu dan apakah si pelaku telah kembali dari Timor Barat. Ini adalah pengetahuan yang sangat penting yang diperlukan oleh tim agar bisa bekerja dengan efektif.

63. Konsultasi-konsultasi sebelum PRK mencakup pertemuan-pertemuan di tingkat distrik, subdistrik, desa, dan *aldeia*. Pertemuan-pertemuan di tingkat distrik memberi pengenalan umum mengenai peran dan dasar hukum dari Komisi dan mengajukan jadwal yang nantinya akan diikuti di distrik. Pertemuan tingkat subdistrik akan dihadiri oleh pejabat pemerintah, pemuka masyarakat, dan perwakilan dari masyarakat sipil. Peserta dengan pengetahuan lokal juga akan diundang untuk mengemukakan hal-hal yang akan menyulitkan atau membantu PRK.

64. Konsultasi lebih lanjut kemudian diadakan di desa-desa dan *aldeia* yang terpilih sebagai lokasi untuk pertemuan PRK. Mereka yang hadir pada rapat konsultasi akan membicarakan dan menyetujui format pertemuan, termasuk peran apa yang akan dimainkan oleh *lisan* dan pemimpin *lisan* setempat. Kemudian dipilih para anggota panel untuk pertemuan PRK. Anggota panel dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk bertindak secara adil dan tidak berpihak, kredibilitas dan pengaruh mereka di masyarakat, serta komitmen mereka pada rekonsiliasi.

65. Tim distrik juga mengadakan serangkaian pertemuan persiapan untuk menerangkan kepada para peserta tentang peran mereka dalam pertemuan PRK yang akan datang. Deponen, anggota panel, dan korban yang namanya tercantum dalam pernyataan deponen kemudian akan diundang untuk mengikuti penjelasan yang diberikan secara terpisah. Penjelasan untuk para anggota panel juga mencakup pelatihan mengenai kemampuan mediasi dan perantaraan serta permainan peran mengenai situasi yang mungkin terjadi pada saat pertemuan. Biasanya pemberian penjelasan dilaksanakan beberapa hari sebelum pertemuan PRK, sehingga informasi yang diterima masih segar di dalam ingatan para peserta.

Pertemuan PRK

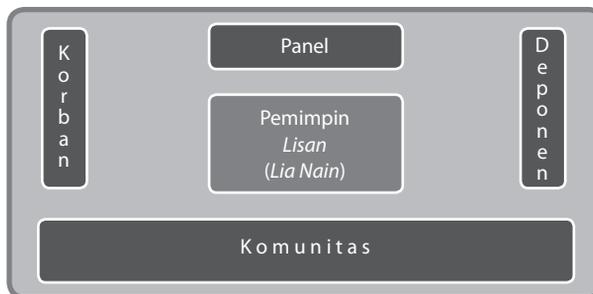
Prinsip-prinsip Pertemuan PRK

- Tujuan utama PRK adalah untuk membantu rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitasnya.
- Prosedur PRK mengandalkan partisipasi sukarela dari semua pihak.
- Metodologinya adalah fasilitasi untuk tercapainya kesepakatan dengan pelaku, dengan partisipasi korban dan keluarga mereka, pemimpin komunitas, serta masyarakat luas.
- Korban dan pihak-pihak berkepentingan lainnya harus mendapatkan kesempatan bicara.
- Semua pihak harus mendapatkan kesempatan menyaksikan pengakuan pelaku.
- Pertemuan harus bersifat antikekerasan dan dalam mempersiapkan pertemuan, langkah-langkah pengamanan harus dilakukan untuk menghindari konflik fisik.
- Pertemuan harus bebas dari alkohol, untuk mencegah emosi menjadi tidak terkontrol.
- Proses PRK harus mengakui bahwa pemahaman tentang konteks politik yang melatarbelakangi kejahatan yang dilakukan si pelaku mempunyai potensi untuk penyembuhan.

Tataletak pertemuan

66. Tim distrik disarankan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat dalam menyiapkan pertemuan PRK, namun biasanya penataan tempat duduk akan mengikuti pola yang tampak pada gambar di bawah ini:

Denah penataan tempat duduk dalam pertemuan PRK



67. Penataan tempat duduk untuk PRK kurang lebih sama dengan yang biasa digunakan dalam upacara *lisan* masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan, di mana para pemimpin *lisan* hadir selama pertemuan dan biasanya didudukkan di tempat-tempat yang khusus di antara pihak-pihak yang bersengketa. Sering mereka duduk di tanah, di atas selembar tikar yang melambangkan proses *lisan*. Para komisaris dan anggota panel berada di depan, menghadap masyarakat. Para korban mendapat tempat di kanan panel, sedangkan pelaku ditempatkan di kiri. Para korban bisa ditemani oleh orang-orang yang bisa memberikan dukungan, seperti anggota keluarga mereka atau staf Dukungan Korban CAVR.

Prosedur

Pembukaan resmi pertemuan

68. Pertemuan PRK sering dimulai dengan upacara *lisan* yang sesuai dengan kebiasaan setempat. Setelah , dilakukan pidato singkat oleh Komisaris Regional atau wakil lain Komisi untuk menyambut tamu dan peserta.

Pidato-pidato

69. Sebuah kesempatan diberikan kepada pemimpin lokal, seperti kepala desa, administrator distrik, koordinator subdistrik, atau perwakilan pemerintah lainnya; pastor, biarawati, atau tokoh-tokoh agama lainnya; dan Komisaris Nasional yang hadir, untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Pidato-pidato ini pada umumnya difokuskan pada makna rekonsiliasi dan pentingnya hal tersebut bagi masyarakat.

Doa bersama

70. Agama berperan penting di dalam kebanyakan komunitas di Timor-Leste. Akibatnya, doa bersama menjadi kebiasaan dan membantu menciptakan semangat kerukunan di permulaan pertemuan.

Pembukaan pertemuan/kata sambutan dari Ketua Panel

71. Ketua panel secara resmi membuka pertemuan dan memperkenalkan para anggota panel. Panel kemudian menyambut semua tamu yang hadir dan berterima kasih atas dukungan serta kerjasama mereka. Panel juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para deponen, para korban, keluarga korban, serta semua anggota masyarakat yang hadir dalam pertemuan.

72. Ketua panel menjelaskan:

- Latar belakang Komisi—asal-muasal, pembentukan, mandat, dan tujuannya
- Fungsi dan tujuan Proses Rekonsiliasi Komunitas
- Konteks legal dari pertemuan rekonsiliasi, termasuk di dalamnya pembacaan keputusan dari Jaksa Agung Timor-Leste yang mengizinkan audiensi berjalan
- Pernyataan PRK mulai diproses

73. Ringkasan kasus para deponen kemudian dibacakan kepada umum.

Kesaksian deponen

74. Setiap deponen kemudian menyampaikan secara lisan tindakan-tindakan yang ia mohon untuk direkonsiliasikan. Deponen kemudian diminta memberikan kesaksian selengkap mungkin dan sebagian besar dari mereka menggunakan kesempatan itu untuk menjelaskan apa yang terjadi dan menempatkannya di dalam konteks. Peserta lainnya tidak diizinkan menyela para deponen yang sedang memberikan kesaksian.

Pertanyaan klarifikasi dari Panel

75. Biasanya kesaksian para deponen kemudian diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan dari panel, walaupun terkadang panel menunggu sampai semua deponen selesai memberikan kesaksian. Ada bermacam-macam jenis pertanyaan, dari klarifikasi atas perbedaan antara kesaksian lisan dan tertulis, sampai dengan mencari gambaran tentang motivasi deponen melakukan suatu tindakan, atau mengidentifikasi pihak-pihak lain yang terlibat di dalam tindakan tersebut, termasuk rantai komando.

Pertanyaan klarifikasi dari para korban yang namanya disebut

76. Para korban diberi kesempatan membuat pernyataan tentang insiden tersebut dan menanyakan kepada deponen tentang apa yang terjadi. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka mendapatkan kesempatan menceritakan kisah mereka kepada komunitas atau mengonfrontasi si pelaku tentang kejahatan yang mereka lakukan.

Pertanyaan klarifikasi dari anggota komunitas

77. Para anggota komunitas yang hadir kemudian mendapatkan kesempatan untuk menanyakan kepada para deponen tentang tindakan-tindakan mereka dan melaporkan kepada CAVR tentang aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh deponen yang belum terungkap dalam kesaksian mereka. Ini juga merupakan kesempatan bagi para anggota komunitas lainnya yang juga menjadi korban dari seorang deponen, namun belum disebut sebagai korban, untuk diketahui oleh panel. Staf komisi mencatat data pribadi dari anggota komunitas tersebut sebagai bagian dari pencatatan pertemuan.

78. Baik korban maupun anggota komunitas diminta membatasi pertanyaan mereka pada tindakan-tindakan yang diuraikan pada kesaksian deponen atau tindakan deponen lainnya yang belum tercatat. Bila seseorang menuduh seorang deponen terlibat dalam sebuah kejahatan berat, maka ia akan diminta untuk memberikan informasi lebih lanjut untuk mendukung tuduhan tersebut. Bila panel merasa bahwa bukti-bukti yang mengindikasikan keterlibatan si deponen dalam sebuah kejahatan berat cukup meyakinkan, pertemuan akan ditangguhkan, sebagaimana ditentukan oleh Regulasi.

Diskusi tentang tindakan rekonsiliasi dipimpin oleh Panel

79. Sesudah pertanyaan-pertanyaan dilontarkan, panel mengumpulkan para deponen dan korban untuk menjelaskan prinsip-prinsip Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas (KRK), serta persyaratan-persyaratannya, yang juga mencakup tindakan rekonsiliasi yang harus dilakukan si deponen. Dalam beberapa kasus, diskusi-diskusi ini juga melibatkan para pemuka *lisan*. Kadang-kadang panel memimpin diskusi-diskusi tersebut di tengah kehadiran semua pihak yang terkait. Pada waktu lain, mereka berbicara dengan setiap kelompok yang berpartisipasi secara terpisah

80. Panel menjelaskan bahwa ‘tindakan rekonsiliasi’ dimaksudkan menunjukkan kepada semua yang hadir tentang ketulusan hati dan komitmen deponen untuk berekonsiliasi dengan korban-korbannya dan komunitas pada umumnya. Hal tersebut tidak dimaksudkan membebani deponen dengan tanggung jawab yang di luar kemampuannya. Panduan pertemuan menganjurkan agar ‘tindakan rekonsiliasi’ berupa permintaan maaf, denda simbolis, kerja bakti, atau kombinasi dari tindakan-tindakan tersebut. Dari laporan-laporan pemantauan pertemuan, jelas bahwa panel mengikuti anjuran itu.

Deklarasi tindakan rekonsiliasi

81. Apabila deponen setuju melakukan ‘tindakan rekonsiliasi’ yang direkomendasikan, ketua panel akan mengumumkan kewajiban yang telah disetujui untuk dipenuhi oleh deponen.

Permintaan maaf/sumpah dari para deponen

82. Setiap deponen kemudian diwajibkan meminta maaf di depan umum tentang perbuatannya dan menyatakan di bawah sumpah untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pada banyak kesempatan, sumpah tersebut diikuti dengan ritual *lisan* yang mengikat si deponen pada komitmennya.

Penandatanganan Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas

83. Ketua panel kemudian menjelaskan kepada semua yang hadir bahwa setiap deponen harus menandatangani selebar KRK. Dalam dokumen ini tercantum:

- Uraian mengenai tindakan yang dilakukan oleh deponen
- Informasi baru tentang pelanggaran yang oleh deponen tidak dimasukkan dalam pernyataan resminya
- Uraian mengenai tindakan rekonsiliasi yang ditentukan dalam pertemuan
- Sebuah pernyataan yang berisi penerimaan tanggung jawab oleh deponen untuk semua tindakan yang tertulis dalam KRK dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan politik

84. KRK dibacakan di hadapan semua yang hadir. Deponen dan semua anggota panel kemudian menandatangani KRK tersebut. Selanjutnya ketua panel menjelaskan bahwa pendokumentasian KRK, termasuk di dalamnya pernyataan

asli dari sang deponen, akan diserahkan kepada Pengadilan Distrik yang relevan, yang akan memeriksa pernyataan tersebut. Setelah semua tindakan rekonsiliasi dilaksanakan, KRK kemudian dicatat sebagai sebuah Keputusan Pengadilan. Dijelaskan bahwa tindakan itu akan memberikan penyelesaian hukum akhir untuk perkara tersebut.

Menutup Pertemuan PRK

85. Biasanya pertemuan PRK diakhiri dengan beberapa kalimat penutup dari pemimpin lokal atau anggota staf CAVR. Peristiwa hari itu kemudian disampaikan kembali secara ringkas dan sebuah pelajaran moral disampaikan dengan tema kebersamaan yang merupakan tujuan hari itu.

Pertemuan Proses Rekonsiliasi Komunitas Caicasa

Pertemuan PRK ini diselenggarakan pada 30 Januari 2004 di Desa Caicasa, Subdistrik Maubara, Distrik Liquiçá. Pertemuan ini melibatkan 20 deponen, semuanya laki-laki yang dulu anggota kelompok milisi Besi Merah Putih (BMP). Caicasa, sebuah komunitas yang tersebar di bukit-bukit barat daya kota Liquiçá, adalah tempat kelahiran BMP, salah satu dari kelompok milisi paling ditakuti di Timor-Leste.

Karena banyaknya jumlah deponen dan jenis tindakan yang dilakukan, empat pertemuan direncanakan diselenggarakan untuk Caicasa. Yang pertama telah dapat diselesaikan dengan sukses di minggu sebelumnya. Yang dipaparkan di sini adalah pertemuan kedua.

Setelah para deponen, anggota panel, dan korban hadir, acara segera dimulai. Koordinator Komisi untuk Distrik Liquiçá menjelaskan mengenai urutan acara untuk hari itu. Kemudian, kepala desa meminta para hadirin tetap tenang dan mendengarkan dengan seksama apa yang akan dikatakan oleh orang-orang. Ia mengatakan bahwa nantinya akan ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan.

Komisaris Regional yang mengetuai panel PRK kemudian menjabarkan prosedurnya lebih terperinci lagi, dengan memberi penjelasan yang tuntas mengenai pentingnya proses ini dalam konteks lokal maupun nasional. Komisaris mendorong masyarakat yang hadir untuk angkat bicara jika ada yang merasa bahwa deponen tidak mengungkapkan secara lengkap, tetapi juga menekankan bahwa mereka harus memberi kesempatan kepada deponen untuk memberi penjelasan terlebih dahulu. Para Komisaris juga mengatakan bahwa para deponen dan peserta sebaiknya berbicara dalam bahasa yang paling nyaman bagi mereka. Bagi sebagian besar orang, ini adalah bahasa Tokodede, walaupun banyak juga yang mengerti Tetun dan bahasa Indonesia.

Komisaris Regional kemudian membacakan keterangan resmi dari Kejaksaan Agung, yang tertulis dalam bahasa Indonesia, yang memberikan izin kasus masing-masing deponen untuk ditangani melalui PRK.

Rangkuman pernyataan 20 deponen dibacakan oleh staf PRK. Para deponen dalam pertemuan ini dijadikan satu karena dalam pernyataan mereka ada tema bersama bahwa mereka dipaksa bergabung dengan kelompok milisi, bahwa mereka tidak memegang posisi yang tinggi dalam kelompok tersebut, dan hanya mengakui telah melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil. (Pernyataan-pernyataan yang terkait dengan tindakan yang lebih berat disisihkan untuk tiga pertemuan lain yang dijadwalkan untuk desa ini.)

Para deponen kemudian diberi kesempatan memberikan uraian lisan kepada para korban dan masyarakat yang hadir. Banyak yang terlihat gugup, bermasalah dengan mikrofon, dan perlu dibujuk untuk menghadap ke arah para korban dan masyarakat. Mutu dan lamanya kesaksian lisan yang diberikan bervariasi antara bercerita dengan bersemangat selama beberapa menit sampai bergumam meminta maaf selama beberapa detik saja. Dalam beberapa kasus para deponen memerinci pelanggaran-pelanggaran yang mereka katakan bukan menjadi tanggung jawab mereka: “Saya tidak membunuh. Saya tidak mengintimidasi siapapun. Saya tidak membakar rumah atau mencuri.”

Banyak di antara mereka adalah anggota milisi bawahan yang didaftarkan masuk BMP dan menjalankan tugas yang tidak penting. Beberapa deponen menyampaikan informasi mengenai kejadian-kejadian terkenal, seperti Pembantaian Gereja Liquiçá 6 April 1999; yang lainnya hadir pada rapat umum milisi di Dili 17 April 1999, yang diikuti dengan pembunuhan di rumah Manuel Carrascalão. Seorang deponen lain pernah hadir pada pertemuan milisi yang juga dihadiri oleh Jenderal Wiranto, tetapi mengaku bahwa ia tidak mengerti apa yang dikatakan karena pertemuan itu dilangsungkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa deponen lainnya tampak jelas kesulitan dan merasa tertekan ketika memberikan kesaksian mereka.

Setelah kesaksian lisan mereka, para anggota panel, korban, dan hadirin diberi kesempatan memberikan komentar dan mengajukan pertanyaan kepada deponen. Pertanyaan-pertanyaan bervariasi dari permintaan mengenai perincian tertentu, seperti tanggal deponen bergabung dengan BMP dan nama orang-orang lain yang terlibat dalam penyerangan tertentu, sampai pada pertanyaan yang lebih umum, misalnya tentang bagaimana orang-orang yang terlibat dalam gerakan klandestin dapat dipaksa bekerjasama dengan milisi. Satu korban mengajukan beberapa pertanyaan kepada keponakannya, salah satu dari deponen, meminta penjelasan lebih lanjut mengenai

penyerangan ke rumahnya yang mengakibatkan terbunuhnya hewan ternak miliknya. Dia merasa bahwa versi cerita yang disampaikan pada pertemuan itu tidak sejalan dengan yang dia dengar mengenai serangan itu dari orang-orang yang terlibat. Sebagian pertanyaan tidak ditujukan kepada deponen tertentu, tetapi lebih merupakan komentar atau cerita mengenai tindakan-tindakan lain yang oleh pembicara dianggap perlu dipertimbangkan.

Ketika para deponen menyangkal tuduhan terhadap mereka, sekelompok orang di antara hadirin terkadang menyuarakan ketidakpuasan mereka. Beberapa deponen terlihat jelas tidak mampu mengingat perincian dari kejadian-kejadian, sementara yang lainnya jelas-jelas mengelak. Ketua panel kemudian mengintervensi untuk mengingatkan deponen bahwa menceritakan kebenaran adalah prasyarat untuk terjadinya rekonsiliasi. Komisi tidak punya wewenang untuk menghukum mereka, tetapi memberikan informasi palsu dalam pertemuan PRK adalah suatu tindak pidana.

Beberapa pertanyaan ditujukan kepada seorang deponen bernama D, tentang penghilangan dan pembunuhan seorang warga desa bernama B. D diketahui ketika itu sedang bersama seorang bernama F yang telah mengikat B sebelum ia dibawa pergi. Para warga menganggap bahwa B telah dibunuh. F juga ikut mendaftar untuk berpartisipasi dalam PRK, tetapi permintaannya ditolak oleh Kejaksaan Agung, mungkin karena bukti-bukti menunjukkan bahwa ia terlibat dalam suatu 'kejahatan berat'.

F masih tinggal di komunitas tersebut. Ia masih belum ditahan atau didakwa dan berkas perkaranya masih ada di Unit Kejahatan Berat. Para warga merasa bahwa F juga perlu menjelaskan apa yang terjadi pada B, akan tetapi ia tidak hadir pada pertemuan. Tanpa kehadirannya, mereka menanyai D mengenai kasus itu. Setelah menyangkal keterlibatannya dalam dugaan pembunuhan B, D dibujuk oleh panel untuk menjelaskan dengan lebih terperinci apa yang menurutnya sebenarnya terjadi.

Seorang deponen lainnya ditanyai tentang pembunuhan seorang laki-laki tua. Deponen ini jelas-jelas tahu banyak tentang kejadian itu dan menanggapi dengan marah bahwa ia lelah dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Ia mengakui bahwa ia memang hadir ketika pembunuhan itu terjadi. Menurutnya ia telah meneruskan informasi yang ia miliki tentang kasus itu kepada pihak yang berwenang dan bahwa ia sekarang mau menyudahi segala tuduhan yang diarahkan kepadanya. Semakin banyak pertanyaan yang ditujukan padanya, ia membalas dengan menuduh salah seorang yang bertanya padanya bahwa ia sendiri adalah informan bagi pasukan keamanan Indonesia. Ketika suasana memanas, staf PRK turun tangan untuk menenangkan keadaan.

Dalam situasi seperti ini, seperti halnya situasi yang lain, jelas bahwa PRK tidak hanya memberi kesempatan kepada para deponen untuk mengakui apa yang telah mereka lakukan, tetapi juga untuk menyatakan apa yang *tidak* mereka lakukan, dengan menanggapi dan mengklarifikasi segala tuduhan yang didasarkan atas desas-desus dan informasi yang tidak dapat diandalkan.

Walaupun para deponen memberikan banyak informasi kepada keluarga para korban dan komunitas yang lebih luas, jawaban mereka kadang-kadang sepertinya sudah diperhitungkan untuk menghindari tanggung jawab atau tuduhan dan bukannya untuk menyampaikan kebenaran. Tampaknya banyak jawaban yang diberikan deponen dapat diterima oleh para hadirin pertemuan, akan tetapi beberapa jelas tidak diterima. Jawaban-jawaban seperti ini disambut dengan protes keras dan tanggapan vokal lainnya dari komunitas.

Wakil Komisi juga diberi pertanyaan, khususnya mengenai “urusan-urusan yang belum selesai”. Orang-orang ingin tahu apa yang akan terjadi pada pelaku lainnya yang ingin mengajukan dirinya untuk rekonsiliasi setelah Komisi menyelesaikan kerjanya. Ada juga pertanyaan-pertanyaan tentang apakah ada rencana untuk proses rekonsiliasi semacam ini dengan para pengungsi di Atambua, Timor Barat.

Akhirnya tidak lagi ada pertanyaan dan masing-masing deponen diberi kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf resmi, memohon ampun, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya di masa lalu. Sebagian besar deponen disambut dengan tepuk tangan oleh yang hadir, namun beberapa tidak.

Ketua panel kemudian meminta masukan atau gagasan dari hadirin mengenai apa yang dapat menjadi ‘tindakan rekonsiliasi’ yang tepat. Setelah berkonsultasi dengan para korban dan pemimpin *lisan*, panel memutuskan bahwa para deponen telah menunjukkan bahwa mereka sepatutnya diterima kembali ke dalam komunitasnya dan bahwa mereka diharuskan hanya untuk membuat permintaan maaf di depan umum bagi para korban dan komunitasnya.

Parapemimpin *lisan* kemudian meminta deponen untuk berpartisipasi dalam upacara *lisan*, di mana beberapa ayam disembelih dan ususnya diperiksa apakah ada yang ternoda. Dari empat ayam yang diperiksa, salah satunya ususnya ternoda, sehingga para pemimpin *lisan* berkesimpulan bahwa beberapa deponen tidak menceritakan kebenaran secara lengkap dan menyatakan bahwa mereka pasti akan menghadapi konsekuensinya. Temuan mereka cocok dengan kesan yang didapat oleh para pengamat pada pertemuan itu bahwa warga masyarakat sudah puas dengan sebagian besar yang mereka dengar, namun ada beberapa pernyataan deponen yang tidak memuaskan. Orang-orang tertentu tidak ditunjuk untuk dikritik, akan tetapi

tampaknya ada pengertian umum di antara yang hadir tentang siapa saja yang belum menceritakan seluruh kebenaran.

Walaupun tidak memuaskan sepenuhnya anggota komunitas, pertemuan ini jelas merupakan kejadian yang penting bagi warga setempat. Lebih daripada 200 anggota komunitas, laki-laki dan perempuan dari segala usia, menghadiri pertemuan ini. Banyak yang menunjukkan pentingnya acara ini bagi mereka dengan mengenakan busana *lisan*. Di antara yang hadir ada keluarga dan teman-teman para deponen dan korban. Umumnya pada penghujung pertemuan para peserta memperlihatkan penghargaan, yang disertai dengan sedikit keberatan terhadap sikap beberapa deponen. Para peserta menyatakan bahwa mereka puas bahwa sejumlah besar bekas anggota milisi yang dulunya terlibat dalam kekerasan terhadap komunitasnya telah dipermalukan di hadapan umum atas tindakan mereka dan telah meminta maaf. Mereka juga mengatakan bahwa pertemuan ini telah membantu seluruh komunitas memahami apa yang sebenarnya terjadi di masa konflik.

Peranan *lisan* (adat) dalam pertemuan PRK

86. Regulasi menentukan langkah-langkah dasar untuk pertemuan PRK. Selain itu, Komisi membuat pedoman untuk menjamin keseragaman minimum di semua distrik. Tetapi, pedoman ini memberikan kelenturan besar untuk memasukkan langkah-langkah atau praktik-praktik lain, dan Komisi mendorong komunitas untuk menggunakan praktik-praktik budaya setempat, dengan maksud untuk meningkatkan rasa memiliki.

87. Tingkat nyata pemanfaatan ritual *lisan* dan bagaimana bentuknya sangat berbeda-beda antarkomunitas. Tetapi ada sejumlah praktik cukup sering terlihat dalam pertemuan PRK. Terutama, upacara *nahe biti boot* ada di hampir semua pertemuan PRK.

Menandai formalitas acara

88. Ritual *lisan* sering dilaksanakan dalam persiapan pertemuan PRK dan untuk menandai pembukaannya. Pemuka spiritual, berpakaian tradisional dan membawa *lulik*, menari sambil menyanyikan monolog, umumnya diiringi bunyi gendang. Di Timor-Leste, gendang biasanya dimainkan oleh perempuan berusia lanjut yang sekaligus menari membentuk barisan pendek mengelilingi sebuah pusat lingkaran seperti jari-jari roda. Perempuan-perempuan ini mengagit gendang kecil dan panjang di bawah ketiak mereka sambil menabuhnya dalam irama yang cepat dan rumit dengan kedua tangan mereka.

89. Upacara pembukaan ini menimbulkan perasaan bahwa PRK tidak hanya dilaksanakan untuk kepentingan deponen yang mencari penerimaan kembali

ke dalam kehidupan komunitasnya, tetapi juga sebagai acara komunitas yang penting bagi seluruh desa. Mantra dan nyanyian pemimpin *lisan* dimaksudkan agar didengar tidak hanya oleh hadirin yang masih hidup tetapi juga oleh para pelindung desa, yaitu nenekmoyang yang dipercayai juga menjadi saksi pertemuan yang akan dimulai. Pakaian yang warna-warni, *lulik*, dan semua perlengkapan upacara, pengucapan mantra, penabuhan gendang, dan tarian meningkatkan kegembiraan upacara dan perhatian para hadirin dan peserta. Dengan begitu PRK memiliki aspek ganda: mengangkat ke permukaan kenangan-kenangan yang menyakitkan tentang kesalahan masa lalu sebagai bagian dari pencarian kebenaran dan pertanggungjawaban yang tidak mudah, tetapi juga sebagai perayaan yang bagi masyarakat sangat menarik dan kadang kala menghibur. Gabungan ini memungkinkan PRK menjadi pengalaman yang bisa menghilangkan pertentangan masa lalu dan mempersatukan kembali komunitas.

90. Setelah acara pembukaan sering terjadi penggelaran tikar secara khidmat, dan Panel akan duduk di atas tikar ini. *Mama fatin* diletakkan di atas tikar, bersama buah pinang, tembakau, dan benda-benda lain yang akan digunakan dalam upacara. Setelah perselisihan diselesaikan, *lia nain*, pelaku, dan para korban bersama-sama mengunyah pinang.

91. Di awal sudah dijelaskan bahwa PRK akan menjalankan prosedur *lisan* dan prosedur yang terkait dengan pemerintah modern, seperti pidato oleh orang-orang dari pemerintah dan pembacaan surat dari Kejaksaan Agung yang mengesahkan pertemuan ini. Menurut pengalaman Komisi, aspek formal dari prosedur—baik yang dari *lisan* maupun prinsip hukum modern—menambah bobot penghormatan yang diberikan komunitas kepada PRK.

Lisan dan Regulasi

92. Sering tidak mungkin memisahkan unsur-unsur *lisan* PRK dari unsur-unsur yang bersumber dari Regulasi 10/2001. Para penyusun Regulasi secara sadar mengambil prinsip-prinsip *lisan*. Sebagai contoh, ketentuan Regulasi yang mengharuskan deponen mengakui tindakan mereka di muka umum adalah salah satu prinsip *lisan*. Akan tetapi, Regulasi tidak mengharuskan deponen meminta maaf di depan umum kepada para korban, walaupun hal ini diharuskan oleh *lisan*. *Lisan* dan Regulasi juga memungkinkan para korban dan anggota komunitas untuk memberikan pandangan mereka tentang perkara yang sedang diselesaikan.

93. Perbedaan utama antara kedua sistem itu adalah dalam di penyelesaian *lisan*, para *lia nain* yang memutuskan sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelaku. Pada PRK, panel yang berhak mengusulkan ‘tindakan rekonsiliasi’ yang pantas untuk deponen, setelah mendengarkan pandangan-pandangan semua pihak yang berkepentingan, termasuk para korban, komunitas, dan para *lia nain*. Dalam PRK deponen berpartisipasi secara sukarela dan bisa menolak melaksanakan ‘tindakan rekonsiliasi’ yang diusulkan. (Dalam kasus seperti ini, masalah akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung.) Di bawah ketentuan *lisan* murni, sang pelaku diharuskan menerima sanksi apapun yang diputuskan oleh para *lia nain*.

94. Perbedaan lain antara *lisan* dan PRK adalah pada persidangan tradisional sang korban harus setuju dengan penyelesaian yang diusulkan agar penyelesaian tersebut bisa diterima oleh *lia nain*. Dalam PRK, panel hanya diharuskan mempertimbangkan pendapat para korban untuk menentukan apa ‘tindakan rekonsiliasi’ yang paling sesuai. Aspek prosedur ini menjamin bahwa kasus-kasus bisa diselesaikan kalau tindakan pelaku merugikan banyak korban di beberapa desa. Pada kasus seperti ini, meminta persetujuan dari semua korban akan menimbulkan masalah logistik yang tidak akan bisa diatasi. Akan sulit juga untuk mengidentifikasi siapa saja korban yang perlu dimintai persetujuan. Sebagai contoh, jika seorang pelaku membakar tiga rumah, yang setiap rumahnya dihuni 15 orang, diperlukan persetujuan formal dari setiap orang itu, yang mungkin masih ditambah lagi dengan orang-orang lain yang barangnya ada di dalam rumah sewaktu dibakar.

95. Walaupun PRK secara formal tidak membutuhkan persetujuan dari para korban, dalam praktiknya persetujuan dari para korban utama diperlukan agar pertemuan bisa diselesaikan secara tuntas. Komunitas setempat menganggap prinsip dasar dari prosedur *lisan* ini berkekuatan mengikat dan dengan demikian percaya bahwa tidak ada deponen yang harus diterima kembali ke komunitasnya tanpa persetujuan dari para korban. Dalam sejumlah kecil kasus, para korban tidak setuju menerima kembali deponen dan panel memutuskan mengembalikan kasus ke Kejaksaan Agung. Dalam sejumlah kasus ini para korban mengatakan bahwa deponen datang ke mereka tidak “dengan hati yang terbuka” yang terbukti dari keengganan mereka mengatakan seluruh kebenaran mengenai apa yang sudah terjadi. Dalam keadaan seperti ini para korban tidak memercayai ketulusan permintaan maaf deponen.

Persamaan dan perbedaan praktik lisan

96. Beberapa prosedur *lisan* khas untuk komunitas tertentu, sementara yang lain cukup umum dalam banyak pertemuan rekonsiliasi. Bahkan ada beberapa praktik *lisan* yang sama di beberapa tempat, tetapi penafsiran dan maknanya bisa berbeda-beda. Misalnya, air kelapa yang dipercikkan ke deponen dan hadirin lain pada upacara di sebuah desa di Maliana berarti “mendinginkan” perasaan yang “panas” yang terkait dengan tindakan-tindakan di masa lalu, tetapi di Liquiçá tindakan yang sama bisa berarti pemurnian dan pembersihan para peserta.

97. Dalam banyak kasus pelaku meminta maaf atau secara lisan berjanji di depan *lulik*, benda-benda keramat yang oleh anggota komunitas dianggap sebagai penghubung mereka dengan nenekmoyang. Tindakan itu dianggap merupakan tanda bahwa para deponen mengucapkan janji dengan kesungguhan hati, karena yang menyaksikan adalah masyarakat dan nenekmoyang. Pada pertemuan lain, ritual yang berbeda seperti meminum arak dicampur dengan darah binatang dilakukan untuk menunjukkan ketulusan deponen.

98. Kebiasaan melakukan ‘sumpah darah’ untuk menegaskan bahwa sebuah perjanjian itu mengikat telah dimanipulasi, sehingga dalam masa pendudukan Indonesia sudah sangat lemah. Pasukan keamanan Indonesia yang menyadari kekuatan ritual ini bagi orang Timor-Leste mengajak dan memaksa orang-orang untuk “minum darah” untuk

memperlihatkan komitmen mereka yang mendalam pada integrasi dengan Indonesia. Sejumlah peserta dalam program PRK mengemukakan bagaimana selama pendudukan Indonesia kekuatan ritual *lisan* telah berkurang karena manipulasi seperti itu. Mereka juga mengatakan bahwa perhatian yang diberikan PRK pada *lisan*, termasuk unsur pengakuan resmi padanya, telah membantu mengembalikan *lisan* sebagai kekuatan yang mempersatukan di dalam komunitas.

PRK tanpa *lisan*

99. *Lisan* berperan penting dalam kurang lebih seperempat dari seluruh pertemuan PRK. Salah satu alasan tidak digunakannya *lisan* pada kasus-kasus yang selebihnya adalah bahwa PRK kadang-kadang melibatkan beberapa kelompok *lisan* yang berbeda. Mencari cara untuk mengikutsertakan semua pemuka *lisan* yang berkepentingan dalam kasus merupakan tugas yang sangat berat bagi staf distrik, padahal mereka juga sudah sangat terbebani untuk menyelesaikan satu rangkaian pertemuan PRK subdistrik sebelum pindah ke pertemuan subdistrik berikutnya. Dalam kasus seperti itu prosedur PRK, yang berlaku secara sama pada semua orang tanpa memandang *lisan*-nya, dilakukan tanpa bantuan *lisan*.

Kasus V

V adalah deponen dari Fatululik di Distrik Covalima. Dia telah mengakui bahwa sebagai anggota milisi Laksaur dia telah mengancam sesama penduduk desa dengan senjataapi. Pada waktu itu Laksaur berusaha menggiring masyarakat menyeberang perbatasan ke Timor Barat. Dalam pernyataannya, V juga mengaku membunuh seekor sapi milik penduduk Fatuloro, desa tetangga. Ia mengidentifikasi para korban tindakannya yang berasal dari desanya dan satu korban dari Fatuloro.

Lisan sebenarnya memperbolehkan para tetua desa mengadakan pertemuan antara V dan komunitasnya, tetapi karena tindakannya juga merugikan para anggota dua komunitas yang berbeda, perundingan harus mengikutsertakan para pemuka *lisan* dari dua komunitas tersebut atau berisiko dipandang memihak kepada deponen atau korbannya. Komisi membuat keputusan bahwa melibatkan kedua desa dalam satu pertemuan PRK akan menimbulkan kebingungan dan kemungkinan konflik. Oleh karena itu Komisi memutuskan untuk melanjutkan tanpa partisipasi dari para tetua kedua desa tersebut. Suatu resolusi dihasilkan dari pertemuan di Fatululik 14 Februari 2003. Dalam pertemuan ini V mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf di depan umum yang kemudian setelah melalui tanya-jawab diterima oleh korban. Ia juga menyerahkan seekor sapi yang kemudian disembelih dan dimakan bersama setelah pertemuan selesai.

Kasus-kasus istimewa

100. Sejumlah deponen telah melakukan tindakan yang merugikan banyak korban di satu atau beberapa desa, tetapi kendala praktis membuat hanya bisa dilakukan satu kali pertemuan PRK untuk kasus seperti itu. Dalam hal ini tim CAVR membangun dua pendekatan. Yang pertama adalah seperti yang ditunjukkan dalam kasus di atas, di mana sebuah pertemuan dilaksanakan tanpa turut sertanya pemuka *lisan*. Pendekatan yang kedua adalah tim CAVR mengadakan pertemuan yang mengikutsertakan para pemuka *lisan* yang mewakili komunitas dengan siapa sang deponen ingin berekonsiliasi. Dalam hal seperti ini dibuat keputusan bahwa terlalu sulit untuk menggabungkan prosedur dan pemangku *lisan* yang berbeda-beda, tetapi lebih baik mengikutsertakan paling tidak satu kelompok daripada tidak samasekali. Para korban dan wakil-wakil dari komunitas yang terkena pelanggaran dipersilakan ambil bagian.

Kasus M

M memberikan kesaksian pada pertemuan di desa asalnya, Desa Ediri di Distrik Liquiçá 11 Maret 2004. Dalam kesaksiannya, seperti pernyataannya yang diberikan sebelumnya, ia bercerita mengenai bagaimana dirinya direkrut secara paksa oleh milisi BMP dan bagaimana sampai diangkat menjadi komandan lokal. Ia mengakui telah memberikan perintah dan sekaligus ikut menyita binatang ternak. M juga mengaku menyaksikan penangkapan pemuda-pemuda setempat yang kemudian dibunuh oleh dua anakbuahnya, walaupun pembunuhan itu bukan berdasarkan perintahnya. Sebagai seorang komandan ia telah ikut berperan dalam beberapa operasi di desa-desa tetangga, tetapi ia mengatakan bahwa korban tindakannya hanyalah penduduk desa asalnya.

Tim Liquiçá mengadakan pertemuan yang berlangsung satu hari penuh dengan menampilkan upacara dan ritual *lisan*. Upacara ini termasuk memanggil para leluhur untuk menyaksikan pertemuan, kemudian menegaskan bahwa kebenaran telah diungkapkan dengan membaca usus babi. Tindakan negatif deponen dikurung di dalam sebuah kelapa yang kemudian dibuang oleh deponen sendiri di hutan. Ia kemudian kembali ke tempat pertemuan membawa buah kelapa lain yang berisi tindakan positifnya yang kemudian diserahkan kepada peserta.

101. Jika deponen menyebutkan suatu komunitas di luar komunitasnya sendiri dengan siapa ia ingin berekonsiliasi, PRK mengatur bersama para pemimpin dan *lia nain* dari komunitas yang bersangkutan agar diselenggarakan pertemuan sesuai dengan *lisan* komunitas tersebut. Laporan-laporan menyebutkan bahwa tidak jarang wakil-wakil *lisan* dari desa asal deponen hadir sebagai pengamat, bukan sebagai pemangku *lisan*, karena kasusnya berada di luar “yurisdiksi” mereka.

Pertemuan PRK di Lela Ufe, Oecussi, 22 November 2002

Masyarakat Lela Ufa, sebuah desa di wilayah kantong Oecussi, pertama kali berhubungan dengan Proses Rekonsiliasi Komunitas melalui tim CAVR yang berkunjung pada September 2002. Tim ini mendapati komunitas yang bersemangat menjalankan proses ini dan segera menerima pendaftar dari anggota komunitas yang ingin ambil bagian dalam pertemuan ini. Proses yang kemudian berjalan menjadi contoh yang baik bagaimana kekayaan tradisi lokal dimasukkan dalam Program PRK.

Dari kampung Bebu saja ada 31 orang yang mendaftar untuk berpartisipasi dalam PRK. Mereka mendaftar umumnya karena tindakan merugikan yang mereka lakukan sebagai anggota milisi Sakunar (Kalajengking) yang berbasis di Oecussi. Tindakan tersebut sebagian besar dilakukan pada 1999, yang mencakup intimidasi terhadap sesama anggota komunitas, membakar rumah, membunuh ternak, dan ambil bagian dalam operasi yang diarahkan oleh militer Indonesia.

Semua anggota komunitas yang sudah mendaftar lebih dulu dimintakan persetujuan dari Kejaksaan Agung, kemudian pertemuan dijadwalkan pada 22 November 2002. Untuk mempersiapkan mereka mengikuti pertemuan, staf Komisi memberi penjelasan kepada para deponen, korban, dan anggota panel. Mereka juga berdiskusi dengan para pemimpin komunitas tentang upacara tradisional apa yang harus dilaksanakan dan pemimpin lokal mana saja yang harus diundang untuk berpartisipasi.

Pada malam sebelum pertemuan, sebagian besar peserta berkumpul untuk mengadakan upacara doa. Ritual *hadeer ai-riin* (Tetun: “membangunkan tiang”) diberi nama demikian karena kepercayaan bahwa sebatang tiang kayu yang digunakan dalam ritual tersebut adalah penghubung antara dunia yang masih hidup dengan dunia para leluhur. Tiang ini “dibangunkan” dan hubungan dijalin melalui ritual pengorbanan hewan. Memanggil para leluhur dengan cara seperti ini dan memberikan persembahan kepada mereka sebelum acara dimulai dipercayai bisa membuat acara berlangsung lancar.

Pagi berikutnya, persidangan dijalankan. Penduduk berkumpul di tempat yang ditentukan. Staf Komisi memeriksa apakah semua deponen dan korban sudah hadir, kemudian mengucapkan selamat datang kepada para peserta. Sebelum memulai secara resmi, *lia nain* melakukan upacara pembukaan di dekat tempat penyelenggaraan pertemuan.

Para tetua sudah mempersiapkan *ai-riin*, yaitu sebuah tiang kayu yang dikenal masyarakat setempat punya kekuatan untuk memanggil orang yang tersesat. Tiang ini berdiri di tengah batu yang disusun sebagai

lingkaran. Batu-batu ini melambangkan jiwa persatuan. Di dalam lingkaran terdapat benda lain—air kelapa, selembur daun dari pohon enau berbentuk kipas, sebuah parang, dan buah pinang—setiap benda mewakili prinsip-prinsip yang dipertahankan dalam pertemuan: air kelapa dan daun untuk mendinginkan kemarahan masyarakat yang masih merasakan “panasnya” dendam, parang untuk mewakili kekuasaan dan kekuatan upacara, sementara keberadaannya di tengah lingkaran mengingatkan bahwa senjata harus diistirahatkan dalam proses ini; dan buah pinang, yang kemudian akan dibagikan kepada para peserta, mewakilkan penyatuan kembali komunitas.

Pada bagian penutup upacara pembukaan yang dilakukan *lia nain*, dua lembar *tais* dihamparkan. Yang pertama adalah *tais mane* atau *tais* laki-laki, melambangkan keterbukaan, memungkinkan suatu hal dilihat dalam bentuk sebagaimana adanya, dengan tujuan membedakan yang baik dari yang buruk. Yang kedua adalah *tais feto*, atau *tais* perempuan, yang dipercayai memiliki kekuatan keseimbangan dan pertimbangan, yang memungkinkan suatu kejadian ditimbang-timbang dengan kejadian yang lain. Kedua *tais* dihamparkan di tanah, bersama tikar yang ditenun dari daun kelapa, tempat Panel duduk. Sekali lagi, tindakan ini sangat kaya perlambang. Penghamparan tikar (*nahe biti boot*) melambangkan pembukaan masalah-masalah yang selama ini telah memecah belah para pembicara. Tikar tidak akan digulung sebelum masalah-masalah tersebut diselesaikan. Ketika upacara pembukaan mendekati selesai, *lia nain* membunyikan gong yang memanggil para hadirin untuk datang dan menyaksikan proses, dan panel menempati tempat duduk mereka.

Sekitar 700 orang menghadiri pertemuan ini. Para pemimpin dari 18 desa sekitar datang untuk mengamati, demikian pula wakil-wakil dari gereja, organisasi nonpemerintah lokal dan internasional. Banyak penduduk desa biasa yang datang ke pertemuan ini harus berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh.

Proses berlangsung sehari penuh, persidangan berjalan lancar dan memuaskan para anggota masyarakat yang menyaksikan. Salah satu kasus deponen dibatalkan setelah tuduhan bahwa ia terlibat dalam tindakan ‘kejahatan berat’ ditunjukkan oleh sejumlah ‘bukti kuat’. Kasus dari 30 deponen selebihnya berlanjut sampai penyelesaian. Ditutup dengan komunitas yang menyatakan bahwa mereka siap menerima kembali para pelaku. Tindakan rekonsiliasi diputuskan setelah dilakukan konsultasi dengan para korban, pemimpin masyarakat, dan deponen sendiri. Tindakan rekonsiliasinya beragam mulai permintaan maaf yang sederhana, pemberian *tais* dan benda upacara yang lain kepada para korban.

Lia nain meminta agar sebelum tindakan rekonsiliasi diumumkan dan hasil persidangan ini diresmikan dengan penandatanganan

Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas, mereka diberi waktu untuk menampilkan upacara ritual untuk menutup pertemuan.

Seekor sapi yang dibawa untuk acara ini oleh para deponen kemudian disembelih. *Lia nain* kemudian membaca isi perut hewan tersebut untuk memastikan bahwa para leluhur puas dengan hasil proses dan bahwa semua sudah bicara sejujurnya ketika memberikan kesaksian. Pesan dari isi perut itu ternyata baik. Sebagian dari darah hewan itu diambil dan dicampur dengan air kelapa sebelum dipercikkan ke para deponen sambil mereka bersama-sama memegang tiang upacara dan menerima restu yang menjadi tanda masuknya kembali mereka ke masyarakat dan pembersihan tindakan masa lalu mereka.

Setelah upacara *lisan* selesai, setiap deponen bergantian meminta maaf di depan umum atas kesalahan mereka dan bersumpah tidak akan menyakiti komunitas mereka lagi. Kemudian mereka menandatangani Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas. Saat penutupan pertemuan, rasa lega terlihat di wajah para peserta, khususnya para deponen. Semua tanda ketegangan dan kemarahan yang terlihat pada saat pertemuan telah hilang dan suasana jadi gembira. Yang hadir kemudian merayakan dengan pesta memakan sapi yang dibawa oleh para deponen untuk menunjukkan niat baik. Anggota masyarakat kemudian melanjutkan pesta dengan menyanyi dan menari sampai menjelang pagi.

Setahun kemudian, ketika Komisaris Regional Oecussi kembali mengunjungi wilayah ini untuk mengembalikan persetujuan yang sudah didaftarkan di pengadilan, ia menyaksikan bagaimana komunitas yang tadinya terpecah sekarang hubungannya sangat baik. Deponen dan korban telah membentuk koperasi yang giat dalam penanaman ubi kayu dan jagung.

Hasil Program PRK

Hasil Umum

102. Secara ringkas, selama periode pelaksanaan program PRK:

- CAVR menerima 1.541 pernyataan dari deponen yang menyatakan keinginan mereka mengikuti PRK dan semua pernyataan diteruskan ke Kejaksaan Agung
- Sebanyak 1.371 kasus berhasil diselesaikan melalui proses pertemuan PRK
- Kejaksaan Agung tidak mengizinkan 85 kasus diselesaikan melalui proses PRK. Kasus-kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung

- 32 kasus ditangguhkan karena masuknya informasi yang dapat dipercaya yang menengarai bahwa deponen mungkin terlibat 'tindak kejahatan berat' atau karena masyarakat menolak menerima deponen
- Angka-angka di atas menunjukkan bahwa hampir 90% kasus yang ditangani berhasil diselesaikan. Sepuluh persen kasus yang tidak selesai adalah kasus-kasus yang deponennya tidak menghadiri pertemuan yang sudah dijadwalkan atau karena pertemuan ditangguhkan atau karena Kejaksaan Agung tidak mengizinkan kasus-kasus tersebut diproses melalui PRK.

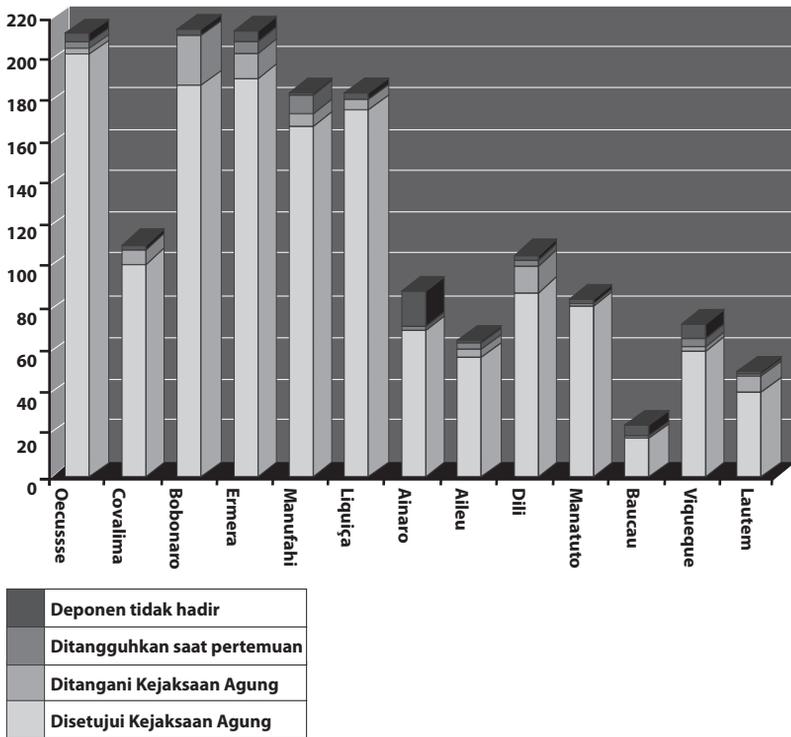
103. Statistik berikut ini memberikan gambaran singkat mengenai kasus-kasus yang ditangani melalui program PRK.

Tabel 2: Hasil program PRK menurut Distrik

| Distrik | Jumlah Pernyataan | Hasil di Kejaksaan Agung | | Disetujui untuk PRK | | Deponen Tidak Hadir | Jumlah Pertemuan PRK |
|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Disetujui | Ditangani Kejaksaan Agung | PRK yang Selesai | Ditangguhkan Saat PRK | | |
| Oecussi | 207 | 204 | 3 | 197 | 3 | 4 | 18 |
| Covalima | 110 | 103 | 7 | 101 | 0 | 2 | 12 |
| Bobonaro | 213 | 189 | 24 | 18 | 0 | 3 | 26 |
| Ermera | 204 | 192 | 12 | 181 | 6 | 5 | 24 |
| Manufahi | 175 | 169 | 6 | 159 | 9 | 1 | 20 |
| Liquiça | 182 | 177 | 5 | 174 | 0 | 3 | 27 |
| Ainaro | 71 | 71 | 0 | 52 | 2 | 17 | 10 |
| Aileu | 62 | 58 | 4 | 54 | 3 | 1 | 19 |
| Dili | 102 | 89 | 13 | 84 | 0 | 2 | 17 |
| Manatuto | 84 | 83 | 1 | 81 | 0 | 2 | 14 |
| Baucau | 19 | 19 | 0 | 13 | 1 | 5 | 9 |
| Lautem | 49 | 41 | 8 | 39 | 1 | 1 | 12 |
| Viqueque | 63 | 61 | 2 | 50 | 4 | 7 | 9 |
| Total | 1541 | 1456 | 85 | 1371 | 32 | 53 | 217 |

| | | |
|---|------|--------|
| Jumlah Pernyataan yang Diterima | 1541 | |
| Jumlah yang Tidak Menyelesaikan PRK | 170 | 11.03% |
| Jumlah yang Menyelesaikan Pertemuan PRK | 1371 | 88.97% |

Diagram Hasil PRK



Variasi hasil antardistrik

Pernyataan yang diterima

104. Regulasi dengan jelas menyatakan bahwa prioritas proses PRK adalah tindak kejahatan yang dilakukan 1999 karena salah satu tujuan PRK adalah mengurangi kemarahan dalam masyarakat yang muncul akibat peristiwa 1999. Kekerasan 1999 paling hebat terjadi di distrik-distrik dekat perbatasan dengan Indonesia—Oecusse, Bobonaro, Ermera, Covalima, dan Liquiça. Tidak mengherankan kalau kelima distrik ini mencatat jumlah deponen terbesar yang ingin mengikuti proses PRK. Jumlah rata-rata pernyataan deponen di masing-masing dari 13 distrik adalah 119, tetapi jumlah rata-rata di distrik bagian barat ini mencapai 180 per distrik. Sebagai perbandingan, jumlah rata-rata pernyataan yang diterima di empat distrik di wilayah paling timur (Lautem, Viqueque, Baucau, dan Manatuto) hanya 54 per distrik.

105. Angka yang tercatat di Distrik Covalima tidak lazim. Meski jumlah pernyataan yang diterima di sana di bawah rata-rata, jumlah ini jauh lebih sedikit dari yang diduga, mengingat bahwa Covalima berada di perbatasan dan kerusakan yang diakibatkan oleh kekerasan 1999 sangat parah. Tim distrik yang bertanggung jawab atas Covalima memperkirakan bahwa rendahnya tingkat partisipasi karena hanya sedikit pelaku tindakan yang merugikan yang kembali ke Covalima dari Timor Barat dibandingkan dengan distrik-distrik lain. Staf nasional yang memantau laporan dari distrik ini juga mendapati kurangnya rasa kebersamaan di antara anggota tim distrik dan ini memengaruhi pelaksanaan program penyuluhan masyarakat PRK.

106. Distrik yang menerima paling sedikit pernyataan adalah Baucau. Beberapa faktor mungkin bisa menjelaskan hal ini. Baucau tidak mengalami kerusakan berat setelah pemungutan suara seperti wilayah-wilayah lain dan ini sebagian menunjukkan bahwa kelompok milisi di Baucau tidak terorganisasi dengan baik atau tidak begitu militan seperti kelompok milisi di distrik-distrik lainnya yang mengalami kerusakan hebat pada 1999. Jadi tampaknya kebencian yang muncul akibat peristiwa 1999 di Baucau tidak separah di distrik lain. Pada saat yang sama kinerja tim distrik yang dihambat oleh kurangnya kebersamaan dan adanya pertentangan pribadi, juga mungkin berpengaruh pada pencapaian yang relatif rendah.

Yurisdiksi Kejaksaaan Agung

107. Dalam hal kasus-kasus di mana Kejaksaaan Agung menggunakan yurisdiksinya, jumlahnya di Distrik Dili dan Baucau dua kali lipat angka rata-rata nasional (angka rata-rata nasional mendekati 5%). Penelitian lebih lanjut mengenai kasus-kasus ini menemukan bahwa Kejaksaaan Agung di kedua distrik tersebut lebih sering menggunakan wewenangnya serta lebih konsisten dibandingkan di distrik-distrik lain. Komisi juga menemukan bahwa jumlahnya yang tinggi bukan disebabkan oleh banyaknya kasus tindak kejahatan di kedua distrik tersebut. Kasus-kasus yang ditolak secara umum meliputi tindak kejahatan yang sama dengan tindak kejahatan di distrik lain yang diproses melalui PRK.

108. Salah satu kemungkinan sebabnya ialah bahwa para penuntut yang bekerja di Unit Kejahatan Berat di kantor Kejaksaaan Agung, yang masing-masing ditugaskan menangani distrik tertentu, menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus-kasus PRK. Tidak adanya pedoman jelas membuka peluang kepada masing-masing jaksa untuk membuat kriteria sendiri dan beberapa jaksa memutuskan bahwa dalam kasus-kasus yang tidak jelas, di mana pernyataan deponen tidak mengindikasikan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan cukup berat untuk diajukan ke pengadilan, mereka mengirimkan kasus-kasus ini ke PRK. Di sisi lain, jaksa lain mungkin memutuskan tidak memberikan persetujuan pada kasus-kasus yang mereka anggap perlu diselidiki lebih lanjut, sebelum mereka memutuskan mengirimkan kasus-kasus tersebut ke PRK.

Deponen tidak hadir

109. Jumlah deponen yang tidak hadir dalam pertemuan tercatat paling tinggi di Distrik Viqueque dan Ainaro, meski sudah memasukkan pernyataan dan menerima izin resmi untuk melanjutkan proses PRK. Di Distrik Ainaro, kebanyakan yang tidak hadir berasal dari satu kelompok deponen. Mereka tidak hadir setelah pemimpin setempat merasa berkeberatan melakukan pertemuan karena pertemuan hanya menangani kasus-kasus tindak kejahatan ringan. Sebagian besar pelaku yang berasal dari distrik ini masih berada di Timor Barat dan pemimpin setempat memutuskan bahwa pertemuan yang hanya menitikberatkan pada kekerasan di masa lalu tidak perlu dilakukan sebelum pelaku kembali. Sementara itu di Viqueque, tidak jelas apa alasan tingginya jumlah pelaku yang tidak hadir.

Jumlah deponen dalam pertemuan PRK

110. Jumlah deponen yang berpartisipasi dalam pertemuan satu hari berkisar antara satu sampai 31 orang. Pertemuan biasanya berlangsung satu hari karena alasan logistik, juga agar memungkinkan masyarakat hadir tanpa terlalu mengganggu kegiatan sehari-hari mereka. Sebagian peserta harus berjalan seharian penuh agar bisa menghadiri pertemuan dan mereka tidak diberi akomodasi atau makanan sehingga kalau pertemuan dilakukan lebih dari satu hari akan mempersulit partisipasi mereka. Dalam satu pertemuan yang berlangsung selama beberapa hari, yaitu pertemuan tiga hari di Passabe, Distrik Oecussi, 55 orang deponen hadir untuk memberikan kesaksian.

Tindakan yang ditangani PRK

111. Sebagian besar deponen di PRK adalah laki-laki berusia antara 25 dan 35 tahun saat mereka melakukan tindak kejahatan. Hubungan dan partisipasi dalam kelompok-kelompok milisi, pembakaran, penyerangan, penahanan sewenang-wenang, dan perusakan harta benda adalah tindakan-tindakan yang paling sering dimasukkan deponen dalam pernyataan mereka. Dalam proporsi kasus yang lebih kecil para deponen memberikan dukungan atau informasi kepada pasukan pendudukan Indonesia dan persoalan yang tidak selesai yang muncul selama konflik politik 1974-1976. PRK tidak menangani kasus-kasus yang langsung melibatkan deponen dalam pembunuhan, perkosaan, atau penyiksaan. Meskipun demikian, ditangani sejumlah kecil kasus di mana deponen mengaku hadir pada waktu terjadinya 'kejahatan berat'.

Tindakan rekonsiliasi

Pembayaran itu penting, bukan untuk menghukum deponen, tetapi agar semua orang bisa melihat bahwa deponen mengakui tanggungjawabnya dan kemudian melihat korban menerima barang yang dibayarkan dan ini berarti bahwa korban menerima orang itu lagi.²⁹

112. Pada umumnya, ‘tindakan rekonsiliasi’ yang disetujui deponen relatif ringan. Masyarakat selalu menekankan pentingnya deponen mengungkapkan kebenaran secara lengkap di depan masyarakat yang hadir dan menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam. Pertemuan itu sendiri merupakan pengalaman yang tidak mudah dan menyakitkan bagi deponen. Jika masyarakat merasa bahwa pengakuan dan permintaan maaf deponen sudah lengkap, terbuka, dan tulus, kebanyakan masyarakat sudah merasa puas hanya dengan tindakan reparasi simbolik atau kerja untuk masyarakat. Misalnya, kerja untuk masyarakat biasanya terdiri atas tugas yang dilakukan seminggu sekali dalam jangka waktu tertentu dan biasanya untuk waktu tidak lebih dari tiga bulan. Contoh-contoh kegiatan yang dilakukan misalnya: memperbaiki bangunan umum, menanam pohon, mendirikan tiang bendera, dan membersihkan halaman gereja atau sarana-sarana lainnya.

113. Kadang korban dan masyarakat bergabung dengan deponen mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam hal ini, pelaku melakukan kerja wajib untuk masyarakat sebagai bagian dari kesepakatan, sedang korban dan masyarakat berpartisipasi secara sukarela sebagai cerminan dari niat baik dan keyakinan mereka akan proses rekonsiliasi. Kerja sama antara pelaku dan korban dalam kerja untuk masyarakat merupakan contoh nyata dari efektivitas PRK dalam menyatukan pihak-pihak yang dulunya bertentangan.

114. Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas kadang mengharuskan deponen membayar ganti rugi kepada korban. Ganti rugi bisa berbeda-beda bentuknya, dari pembayaran uang tunai atau barang, yang tujuannya memberi pengganti kepada korban atas barang yang hilang, dicuri, atau dihancurkan, seperti ternak, sampai pada pembayaran yang sifatnya simbolis yang mempunyai nilai ritual. Jadi, dalam sejumlah pertemuan, terutama di pedesaan dan di Oecussi, deponen memberikan barang-barang yang dibutuhkan untuk upacara tradisional seperti kain tenun *tais*, *belak* (perhiasan dada), dan *morten* (kalung dari batu).

Kekuatan permintaan maaf

Jumlah kasus yang deponennya hanya diharuskan meminta maaf jauh lebih tinggi dari perkiraan semula. Secara keseluruhan, permintaan maaf di depan umum dilakukan dan diterima secara tulus, terutama bila dilakukan dalam konteks upacara *lisan*.

Sebagian orang merasa heran karena di banyak desa, penduduk hanya menginginkan permintaan maaf secara tulus dan terbuka sebagai syarat rekonsiliasi dan tidak meminta ganti rugi, kerja bakti, atau hal lainnya yang dianggap bersifat menghukum. Salah satu faktor yang bisa menjelaskan gejala ini adalah eratnya hubungan kekerabatan masyarakat Timor-Leste. Mengakui secara tulus dan

terbuka kesalahan yang dilakukan di masa lalu dan meminta maaf bisa melibatkan emosi yang mendalam terutama bila keluarga mereka sendiri, pemimpin agama, serta pemimpin politik setempat ikut hadir, karena mereka berpengaruh pada masa depan para pelaku dan berpengaruh pada seluruh masyarakat setempat yang setiap hari akan selalu berhubungan dengan pelaku selamanya. Sebagai perbandingan, pengakuan dosa dan permintaan maaf di depan orang-orang yang tidak dikenal, yang mungkin tidak akan ditemui lagi, akan lebih mudah dilakukan.

Meski banyak permintaan maaf sudah disampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat, sebagian permintaan maaf disampaikan hanya secara selintas dan tidak memuaskan korban dan masyarakat. Sebagian deponen mungkin tidak tulus meminta maaf karena mereka tidak merasa bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. Ini lebih banyak terjadi karena banyak anak muda yang dipaksa ikut milisi dan menganggap diri mereka adalah korban. Dalam beberapa kasus, orang-orang merasa ditekan oleh penguasa setempat untuk ikut PRK, meskipun mereka belum mencapai titik di mana mereka benar-benar merasa menyesal atas tindakan mereka di masa lalu.

Efektivitas program PRK

115. Untuk menilai efektivitas program PRK, CAVR melakukan dua kali pemantauan dan evaluasi internal selama tahap pelaksanaan. Penilaian ini bertujuan mengevaluasi tingkat kepuasan peserta terhadap proses PRK dan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang bisa diperbaiki di masa mendatang. Penilaian ini didasarkan pada jawaban yang diberikan atas serangkaian pertanyaan baku oleh orang-orang yang ambil bagian sebagai deponen, korban, anggota panel, atau masyarakat setempat.

116. Evaluasi pertama, dilakukan pada Maret-April 2003, didasarkan pada wawancara dengan 40 peserta—sepuluh deponen, sepuluh korban, sepuluh anggota panel, dan sepuluh anggota masyarakat—yang berasal dari lima distrik. Masing-masing orang yang diwawancarai telah menghadiri pertemuan PRK tiga bulan sebelumnya.

117. Evaluasi kedua dilakukan pada Agustus 2003 oleh tim distrik di tigabelas distrik. Sebanyak 116 orang yang telah mengikuti PRK diwawancarai.

Mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam komunitasnya

Saya merasa sangat senang dengan proses PRK karena sekarang kita bisa hidup damai. Sebelumnya saya tidak bisa berbicara dengan [deponen]. Saya ingin mereka mengakui apa yang mereka lakukan. Saya rasa saya sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan. Sekarang saya merasa lebih bebas. Saya merasa dekat dengan deponen.

Korban - Aileu³⁰

Sebelum [PRK] saya merasa malu berjalan di desa. Sekarang kalau saya jalan-jalan, saya merasa lebih bebas. Sebelumnya masyarakat kadang tidak mau bicara dengan saya. Sekarang saya masyarakat sudah lebih terbuka. Sebelumnya saya punya beban setiap saya pergi ke ladang.

Deponen – Aileu³¹

Sebelum ikut [pertemuan PRK], ketika kami saling bertemu di jalan, kami masih memendam rasa saling membenci. Kami belum pernah secara tulus saling menerima. Kami orang Timor bisa lama sekali memendam rasa marah.

Deponen - Los Palos³²

Sekarang saya sudah mendapatkan kembali pekerjaan lama saya sebagai guru SMA. Mereka meminta saya kembali bekerja karena mereka melihat saya menceritakan semuanya selama pertemuan. Semua orang kembali menjalani hidup mereka, saya bisa bergerak bebas lagi.

Deponen – Dili³³

Kami menghadiri dua pertemuan biti boot – satu di aldeia dan satu lagi di suco. Pertemuan itu bagus karena melalui rekonsiliasi kita bisa mengakui semua perbuatan kami—bertempur, membakar rumah—termasuk rumah kepala desa. Melalui proses ini kami bisa meminta maaf dan mereka mengampuni kami. Kami memperbaiki atap rumah—ini bukan hukuman tetapi suatu simbol rekonsiliasi. Setelah rekonsiliasi kami merasa baik, karena selama rekonsiliasi kita bersepakat bahwa tidak seorangpun bisa berkata bahwa kami ini pengungsi—kasusnya sudah selesai.

Deponen - Aileu³⁴

118. Penelitian yang dilakukan Komisi menunjukkan bahwa para deponen, korban, dan anggota masyarakat semua merasa bahwa proses PRK memberi sumbangan besar untuk rekonsiliasi. Hampir semua deponen yang diwawancarai menyatakan bahwa hubungan mereka dengan masyarakat jauh lebih baik setelah mereka berpartisipasi dalam pertemuan PRK. 96% dari semua orang yang diwawancarai mengatakan bahwa PRK telah mencapai tujuan utamanya yaitu memajukan rekonsiliasi di masyarakat.

119. Salah satu alasan mengapa hasilnya positif ialah bahwa PRK menyediakan sebuah forum untuk pertukaran informasi secara terbuka. Ini memungkinkan pelaku dan korban untuk melepaskan emosi yang sudah lama terpendam. Meski pertukaran pikiran ini bisa menimbulkan perasaan yang kasar, marah, dan air mata, tetapi jika pelaku dirasa sudah berusaha maksimal untuk menceritakan kebenaran dan sungguh-sungguh menyesal, korban dan masyarakat bisa menerima mereka dengan cara yang tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada proses PRK.

Kekhawatiran mengenai rapuhnya rekonsiliasi

Siapa yang akan menangani masalah kami di masa datang? Apa yang terjadi kalau besok ada orang yang memukul saya? Siapa yang akan memantau? Kami belum menerima surat dari Pengadilan. Kami membutuhkan surat itu dan kami ingin ada orang lain yang memantau keadaan di masa datang. Bila ada masalah lagi, bagaimana kita akan memecahkan masalah ini?

Deponen - Ainaro³⁵

120. Meskipun ada perasaan bahwa PRK telah membantu memajukan rekonsiliasi dan meredakan amarah masyarakat, banyak warga desa masih menyatakan khawatir bahwa perdamaian yang baru terbentuk di masyarakat sangat rentan. Beberapa deponen khawatir bahwa walaupun masyarakat sudah mengampuni mereka melalui proses PRK, ini tidak selalu bisa melindungi mereka dari balas dendam atau pengucilan sosial. Namun demikian, proses PRK yang berdasarkan hukum dan terkait dengan sistem peradilan formal dianggap sangat penting.

Memulihkan martabat korban

121. Apapun keberatan yang ada di kalangan mereka, kebanyakan korban siap memaafkan deponen. Korban biasanya bilang bahwa karena deponen bersedia mengikuti proses PRK, mereka juga bersedia memaafkan. Ke-21 korban yang diwawancarai CAVR selama evaluasi internal menyampaikan bahwa mereka memaafkan sepenuhnya pelaku. Meskipun demikian, beberapa korban merasa frustrasi karena pelaku pembunuhan atau perkosaan terhadap keluarga mereka masih bebas di Timor Barat dan tidak bisa dibawa kembali untuk menghadapi masyarakat atau pengadilan. Dalam banyak kasus, korban tindak kejahatan ringan adalah juga korban tindak kejahatan berat. Meski mereka merasa puas dengan hasil PRK, mereka tidak puas dengan lambatnya proses untuk mencapai keadilan yang menyeluruh.

Menetapkan kebenaran tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia

Saya tidak seperti mereka [dua orang deponen di pertemuan yang dijadwalkan, keduanya anggota milisi]. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, saya tidak melakukan tindak kejahatan apapun. Saya bisa tinggal dengan masyarakat dan jika ada orang yang mau menghindar dari saya, itu urusan mereka. Saya ingin ikut PRK karena saya tidak ingin anak dan cucu saya punya masalah di masa datang. Bagi saya persoalan ini harus berhenti sampai di sini.

Deponen - Dili³⁶

Saya tidak harus ikut proses PRK tetapi sebagai warga negara saya ingin terlibat. Saya merasa harus memberikan pernyataan tentang tahun 1999...Di masa pendudukan saya seorang liurai dan pekerjaan saya semua orang tahu. Saya berhubungan dengan Falintil dan membantu mereka dengan uang...Sebuah organisasi baru dibentuk yang diberi nama FPDK [Forum Persatuan, Demokrasi dan Keadilan]. Nama saya dimasukkan oleh Camat. Saya tidak pernah ikut kegiatan. Sebagai liurai, saya diminta oleh camat untuk memberikan nama orang-orang yang harus bergabung dengan milisi Darah Merah. Saya harus mencantumkan 20 nama dari desa ini. Jika tidak, saya akan dicurigai. Waktu itu, kita semua harus hidup dengan “kepala dua” (ulun rua) supaya bisa bertahan hidup. Pada tahun 1999, setelah referendum, FPDK dibubarkan. Organisasi ini tidak melakukan hal apapun yang jelek.

Deponen - Ermera³⁷

122. PRK tidak hanya memberikan kesempatan kepada deponen untuk mengaku kepada korban dan rekan mereka apa yang telah mereka perbuat, tapi juga untuk menjelaskan apa yang tidak mereka lakukan. Konflik selalu menimbulkan kekacauan dan selalu ada informasi yang diputarbalikkan, dibesar-besarkan, dan dibuat-buat. Karena tidak ada cara menentukan kebenaran, desas-desus bisa dianggap sebagai kebenaran. Sering deponen dalam pertemuan PRK mengaku bertanggung jawab atas perbuatan tertentu dan oleh masyarakat dituduh telah melakukan perbuatan yang lain. Dalam banyak hal, deponen bisa memberikan bukti terperinci bahwa mereka tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dengan demikian, pelaku bisa membatasi tuduhan yang memang berdasarkan fakta dan menolak tuduhan yang hanya berdasarkan pada desas-desus.

123. Banyak deponen menyatakan bahwa pada 1999 mereka dipaksa mengikuti kegiatan milisi. Masyarakat bisa menerima bahwa hal ini memang terjadi selama konflik dan banyak pemuda dipaksa menjaga pos milisi dan ikut dalam kegiatan lain milisi. PRK memberikan kesempatan kepada korban dan orang lain untuk

mengajukan pertanyaan apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku merupakan hal yang dipaksakan atau apakah mereka mengatakan demikian sebagai dalih saja.

124. Dalam kasus-kasus lain, deponen yang dituduh bekerjasama dengan pasukan keamanan Indonesia atau melakukan tindakan pelanggaran lain menyatakan bahwa mereka sebenarnya bekerja di bawah pengarahannya pemimpin gerakan klandestin dan bahwa kerja sama mereka dengan pasukan keamanan merupakan samaran untuk menutupi peran mereka yang sebenarnya.

Pertemuan PRK di Fafelebo, Liquiçá, 29 Oktober 2002

Persiapan pertemuan PRK di Desa Fafelebo dilakukan berdasarkan asumsi bahwa prosedurnya relatif singkat, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Satu-satunya deponen yang memberikan kesaksian sudah mengakui bahwa dirinya ikut terlibat dalam pemukulan dan penghinaan terhadap salah seorang anggota masyarakat dan pernyataannya diperkuat oleh kesaksian korban.

Meskipun demikian, saat pertemuan sedang berlangsung, muncul cerita yang menggambarkan bagaimana istilah 'pelaku' dan 'korban' kadang tidak tepat untuk menjelaskan peran kompleks yang dimainkan setiap orang selama konflik politik. Salah satu sisi positif PRK ialah kemampuannya untuk menguraikan dan menjelaskan kompleksitas seperti ini, sehingga masyarakat yang hadir bisa lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi.

Deponen yang bernama P memulai kesaksiannya dengan menceritakan kejadian-kejadian pada Mei 1999. Saat itu ia bertugas sebagai petugas polisi yang bertanggung jawab atas desa, dan dihubungi oleh J, Babinsa (bintara pembina desa, petugas militer yang bertanggung jawab atas keamanan satu desa) setempat. J memberi tahu P bahwa sepasang sepatu milik seorang tentara Indonesia baru saja dicuri dan dia mencurigai seorang penduduk setempat, D, sebagai pencurinya dan mengirimkan sepatu tersebut ke pejuang Falintil di hutan.

Orang yang dicurigai mencuri sepatu tentara tersebut, D, dipanggil. Saat dia dipertemukan dengan kelompok itu pertama-tama D dipukul dan ditendang oleh Babinsa sebelum P memisahkan mereka. Pada saat itu, P menampar dan menendang korban dan mendorongnya sampai jatuh dan menyuruh korban melakukan *push-up* 10 kali di depan mereka serta merangkak di lantai. Setelah selesai D dibiarkan tergeletak di lantai.

Pada awalnya, saat mendengar kesaksian P, panel memutuskan untuk memberikan hukuman kerja untuk masyarakat selama tiga hari, yaitu memperbaiki pintu dan jendela sekolah. Tetapi, P kemudian menjelaskan motivasinya mengapa dirinya ikut memukul dan melecehkan D.

P menjelaskan bahwa saat itu kegiatan milisi memuncak dan tidak terkontrol. Ketika mengetahui bahwa D dicurigai mencuri sepatu tentara untuk dikirim ke Falintil, P khawatir D akan dibunuh atau desanya diserang sebagai tindakan balas dendam. P juga mengatakan bahwa ia masih bersaudara dengan D dan ingin melindunginya. Ia melakukan campur tangan dengan harapan bahwa setelah korban dipermalukan di depan orang lain maka mereka akan puas dan ia bisa menyelamatkan nyawa D.

Masyarakat setempat mengakui bahwa memang saat itu ada risiko D dapat dibunuh karena mencuri sepatu tentara. D menerima penjelasan P tentang apa yang terjadi dan bahwa P tidak melakukan pemukulan untuk menghukumnya tetapi untuk menyelamatkannya. Saat berbicara dengan panel, sebagai korban ia menawarkan diri untuk ikut melakukan kerja untuk komunitas untuk memperlihatkan bahwa yang terjadi di masa lalu sudah dilupakan dan hubungan kedua belah pihak sudah pulih.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan upacara pemotongan ayam dan babi dan makan bersama. Pada akhir pertemuan seorang wakil pemuka *lisan* menyatakan bahwa masyarakat telah terpecah belah karena konflik politik yang memaksa mereka melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Penyebab perpecahan ini sekarang sudah dihilangkan.

Mempromosikan rekonsiliasi

125. Menurut orang-orang yang ambil bagian, program PRK memberikan sumbangan yang sangat berarti untuk membangun rekonsiliasi di tingkat individu, kampung, maupun desa. Proses ini memberikan forum di mana setiap individu bisa mengungkapkan perasaan maupun keyakinan mereka yang sudah lama terpendam, berbagi rasa marah dan penyesalan, dan bertekad meninggalkan masa lalu yang penuh kekerasan. Konflik politik meninggalkan warisan rasa saling curiga dan saling membenci di semua lapisan masyarakat Timor-Leste. Dengan memberi masyarakat kesempatan untuk meninjau sejarah masa lalu, PRK ikut andil dalam menghapus rasa saling curiga yang sebelumnya menghambat proses rekonsiliasi.

126. Program PRK merupakan satu dari berbagai program rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Komisi. Sementara sasaran PRK adalah ketegangan di tingkat bawah masyarakat, Komisi juga berusaha meredakan ketegangan yang ada di tingkat nasional. Dalam Audiensi Publik Mengenai Konflik Politik Internal 1974-

1976,³⁸ misalnya, ‘pelaku proses’, termasuk pemimpin politik yang memimpin partai-partai politik saat konflik internal berlangsung dan wakil dari partai-partai politik sekarang ini, berbicara kepada seluruh bangsa. Mereka secara terbuka menerima tanggung jawab mereka atas perbuatan mereka, menyampaikan penyesalan atas tindakan mereka atau partai mereka yang telah membuat orang lain menderita, dan, pada hari terakhir audiensi yang berlangsung selama tiga hari, menyatakan rasa solidaritas dalam suatu acara penutupan yang mengharukan. Dalam peristiwa yang luarbiasa ini, yang dipenuhi pengunjung dan disiarkan ke seluruh penjuru negeri ini, elit politik Timor-Leste memperlihatkan di depan umum bagaimana perbedaan-perbedaan di masa lalu bisa dikesampingkan untuk memperkuat negeri baru ini.

127. Pertemuan umum lainnya menampilkan pengalaman korban dari berbagai pihak yang berseteru sehingga turut menyumbang pada persepsi masyarakat yang lebih seimbang dan tepat mengenai sejarah bersama. Audiensi untuk Korban dan Lokakarya Pemulihan membantu korban memulihkan martabat yang telah diinjak-injak dan meredakan rasa marah yang bisa memperkuat perpecahan yang sudah ada. Kegiatan pemetaan komunitas mendorong adanya eksplorasi di tingkat desa mengenai masa lalu dan membantu pengembangan versi bersama mengenai apa yang terjadi. Program radio mingguan yang diproduksi oleh Komisi mendorong perenungan dan debat mengenai rekonsiliasi. Dengan kampanye informasi di Timor Barat, para pengunjung menjadi mengetahui kegiatan Komisi, termasuk program PRK bagi mereka yang kembali ke Timor-Leste dan mereka bisa membuat pernyataan yang bisa memberikan keseimbangan pandangan dalam Laporan Akhir. Diharapkan Laporan ini akan mendorong rekonsiliasi dengan menyajikan suatu versi tentang apa yang terjadi berdasarkan penelitian yang objektif dan teliti dan bukan berdasarkan informasi yang terbatas dan desas-desus.

128. Komisi menyadari bahwa tujuan rekonsiliasi masih belum tercapai dan tujuan ini harus tetap menjadi bagian penting dari kebijakan nasional di masa depan. Hanya dengan keberlanjutan program-program praktis di lapisan bawah masyarakat, klarifikasi dan pendidikan sejarah, dan kesadaran bahwa tujuan masih belum tercapai, rakyat Timor-Leste bisa berharap membebaskan diri dari perpecahan di masa lalu. Komisi menyadari bahwa sebagian dari perpecahan ini merupakan hasil dari manipulasi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku dari luar negeri, terutama Indonesia. Namun demikian, rakyat Timor-Leste harus memikul tanggung jawab juga. Masa lalu harus dihadapi, kesalahan kedua belah pihak harus diakui, dan rasa benci serta kekerasan yang berkaitan dengan politik harus dipahami bahwa itu hanya menyebabkan penderitaan. Bekerja untuk mencapai tujuan rekonsiliasi itu amat sangat penting, tidak hanya bagi mereka yang tinggal di wilayah Timor-Leste, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan kembali rasa saling percaya dan pemahaman bersama dengan orang-orang Timor-Leste yang masih berada di Timor Barat.

Pelajaran yang diperoleh

129. Karena program PRK unik, Komisi bisa mengambil pengalaman serupa di negara lain untuk dijadikan pegangan, tetapi tidak bisa semata-mata menirunya. Dengan memulai program baru dan yang belum pernah diuji ini, Komisi berhasil mencapai hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, tetapi sering ada kesenjangan antara kenyataan dan apa yang tertulis. Beberapa pelajaran berharga bisa ditarik dari pengalaman merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan program PRK, untuk program rekonsiliasi komunitas di masa depan di Timor-Leste dan untuk negara lain yang mempertimbangkan program yang serupa.

Pelaksanaan Program

130. Pertama-tama, mempersiapkan program PRK merupakan tugas yang jauh lebih besar, lebih rumit, dan lebih banyak memakan waktu dan tenaga dibanding perkiraan semula. Sebelum pertemuan rekonsiliasi pertama bisa dilakukan, prosedur harus disepakati dan diuraikan, peran peserta ditetapkan, buku pedoman pelatihan ditulis, staf dilatih, program penyuluhan masyarakat diselenggarakan, program untuk merangkul tokoh-tokoh berpengaruh di distrik dilaksanakan, dukungan dan transportasi untuk staf yang bekerja di subdistrik disediakan, tempat pertemuan dipersiapkan, pernyataan pelaku dicatat, prosedur kerja dengan Kejaksaan Agung ditetapkan, dan berbagai tugas lain diselesaikan. Rencana strategis tidak mengantisipasi semua tantangan yang akan muncul dalam tahap persiapan ini dan ini menyebabkan pertemuan harus diundur dari jadwal semula.

131. Kantor nasional PRK juga membuat perhitungan yang terlalu rendah tentang waktu dan tenaga yang dibutuhkan agar masyarakat memahami konsep yang samasekali baru ini. Sejalan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, partisipasi masyarakatpun meningkat.

Peran korban

132. Lebih jauh, meski semua kategori peserta program PRK, termasuk korban, menyatakan bahwa mereka mendapat manfaat dari partisipasi mereka, Komisi harus lebih banyak mempertimbangkan peran dan sumbangan korban. Komisi memahami bahwa proses ini tidak akan menyembuhkan luka korban atau memberikan mereka pengganti untuk yang sudah terlanjur hilang. PRK memberi korban suara dan pertanggungjawaban dalam tingkatan tertentu atas tindakan pelanggaran yang mungkin tidak akan bisa dituntaskan dengan cara lain. Walau demikian, ‘tindakan rekonsiliasi’ yang dimintakan kepada pelaku pada umumnya hanya berupa ganti rugi yang bersifat simbolis. Sebagian korban juga mengemukakan merasakan tekanan tidak langsung dari masyarakat untuk melakukan rekonsiliasi dengan pelaku.

133. Peran korban dalam proses keadilan apapun merupakan soal yang rumit. Dalam hal PRK, peran korban harus diletakkan dalam konteks prinsip dasar Komisi saat program ini dirancang. Komisi berharap bisa menyelesaikan kasus dalam jumlah besar, sambil tetap menghormati struktur sosial masyarakat dengan memberi

peran yang penting kepada pemimpin lokal, karena menyadari bahwa masyarakat ingin menyelesaikan pertentangan setempat dan menutup secara simbolis masa penuh konflik dan bahwa di Timor-Leste konsep identitas individu terkait dengan perasaan mereka sebagai bagian dari masyarakat. Di tengah kompleksitas tujuan dan hambatan, penderitaan korban dan hak mereka untuk mendapat pemulihan harus selalu dihormati dan diperhatikan. Pedoman mengenai hak korban untuk memberikan pendapat mengenai ‘tindakan rekonsiliasi’ yang harus dilakukan oleh pelaku dan kedudukan yang kuat bagi korban dalam struktur pembuatan keputusan PRK akan membantu menjamin agar kepentingan mereka tidak diabaikan.

Tindakan rekonsiliasi

134. Salah satu hasil yang mengejutkan dari proses PRK ialah bahwa ‘tindakan rekonsiliasi’ yang wajib dilakukan oleh pelaku kejahatan secara umum jauh lebih ringan dibandingkan perkiraan Komisi. Bahkan dalam berbagai pertemuan rekonsiliasi untuk tindak pelanggaran ringan, pelaku tidak diminta untuk melakukan apa-apa; mengakui kebenaran secara jujur dan memohon maaf saja sudah dianggap cukup. Bentuk-bentuk ‘tindakan rekonsiliasi’ juga berlainan di setiap distrik.

135. Misalnya, deponen di Oecussi cenderung diminta membayar ganti rugi berupa uang, sementara deponen di Bobonaro kebanyakan diminta untuk melakukan kerja untuk masyarakat. Aspek ini sangat dipengaruhi *lisan* setempat dan dalam beberapa kasus, pandangan pemimpin setempat yang duduk di panel. Di sisi lain, ini adalah hasil yang positif karena menunjukkan bahwa format pertemuan cukup fleksibel untuk mengakomodasi pandangan setempat. Di sisi lain, hal ini mencerminkan tidak adanya keseragaman dalam menangani tindak pelanggaran yang sama. Adanya serangkaian pedoman yang menyebutkan ‘tindakan rekonsiliasi’ yang sesuai dengan tindakan pelanggaran tertentu bisa mendorong adanya keseragaman.

Hubungan antara Kejaksaan Agung dengan Komisi

136. Selama berlangsungnya program PRK, minat masyarakat dan permintaan mereka untuk mengikuti pertemuan meningkat tajam dan ini menyebabkan beban Komisi bertambah 50% daripada yang direncanakan semula. Permintaan yang tinggi ini memberikan tekanan yang sangat besar kepada Komisi dan Kejaksaan Agung.

137. Menurut jadwal yang ketat yaitu tiga bulan untuk setiap subdistrik, Komisi memerlukan Kejaksaan Agung untuk memproses kasus secara cepat supaya bisa ditangani sebelum tim subdistrik melanjutkan ke subdistrik berikutnya. Pada tahap awal program, Kejaksaan Agung sering tidak mampu menyelesaikan kasus dalam waktu yang dijadwalkan 14 hari dan meminta perpanjangan waktu selama 14 hari hampir untuk semua kasus. Salah satu penyebabnya adalah kebutuhan penerjemahan. Kebanyakan staf Unit Kejahatan Berat adalah orang internasional PBB yang bahasa kerjanya adalah bahasa Inggris, sedang semua pernyataan PRK berbahasa Tetun atau Indonesia. Selain itu, sebagian jaksa sangat berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

138. Masalah ini akhirnya bisa diselesaikan melalui kerjasama yang lebih dekat antara kedua lembaga yang dicapai melalui komunikasi dan pertukaran informasi secara teratur. Karena permintaan untuk mengikuti PRK terus meningkat, terutama mendekati tahap akhir PRK, beban kerja kedua lembaga juga terus membesar. Berkat kerja keras dan sikap yang lebih pragmatis dari kedua pihak, program ini akhirnya bisa diselesaikan sesuai jadwal.

Hubungan antara PRK dengan pengadilan

139. Masing-masing dari 1.371 Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas harus dipelajari oleh Pengadilan Distrik dan, jika disetujui, dikeluarkan sebagai Perintah Pengadilan. Menjelang berakhirnya program PRK, menyelesaikan proses di pengadilan ini menjadi tantangan yang serius. Pengadilan sudah terbebani kasus yang menumpuk. Untuk menuntaskan kasus-kasus yang menumpuk ini, Komisi menugaskan staf CAVR bekerja di bagian pendaftaran di semua Pengadilan Distrik. Begitu upaya untuk memperlancar peninjauan terhadap Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas ini berhasil diterapkan, kasus-kasus yang masuk ke pengadilan bisa diselesaikan dengan cepat. Sebuah keputusan untuk menugaskan staf Komisi untuk memberi tahu deponen tentang keputusan pengadilan juga berhasil mengatasi penumpukan kasus.

140. Meskipun kalau dilihat dari sudut kasus-kasus PRK menambah beban kerja sistem peradilan formal yang sudah menumpuk, program ini juga meringankan beban pengadilan. Sebagian, jika tidak semua, kasus yang ditangani Komisi melalui program PRK bisa saja dilaporkan oleh korban kepada polisi dan bahkan diajukan ke pengadilan. Program PRK secara efektif membuat tidak perlu dilakukannya penyelidikan polisi, penyiapan berkas dakwaan oleh jaksa, persidangan pengadilan, dan administrasi pengadilan, dan tak perlu ada penjara yang lebih besar untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Dampak lebih luas Program PRK

PRK sebagai simbol berakhirnya konflik

Hari ini adalah hari berakhirnya penderitaan, kekerasan, dan perpecahan selama 24 tahun dalam masyarakat kita. Tahun 1999 kita menyaksikan tentara Indonesia dan milisi pergi. Tanggal 20 Mei 2002 kita merayakan kemerdekaan kita sebagai negara. Tetapi baru hari ini, kita sebagai masyarakat bisa terbebas dari penderitaan, dari masa lalu yang mengerikan. Mari kita menggulung tikar dan ini akan menjadi simbol berakhirnya semua ini. Mulai saat ini, kita akan melihat ke depan saja. Mari kita makan dan menari bersama dan menyambut masa depan.

Pemuka masyarakat – Maliana³⁹

141. Selain memberi masyarakat kesempatan untuk memikirkan dan mencari penyelesaian untuk masalah antarpribadi dalam perselisihan, bagi banyak masyarakat, PRK menjadi simbol berakhirnya konflik yang berlangsung lama. Meskipun tujuan resmi pertemuan PRK ialah memberikan kesempatan kepada deponen untuk bisa diterima kembali di masyarakat dengan mengungkapkan kebenaran dan melakukan ‘tindakan rekonsiliasi’, pada kenyataannya proses saling memberi antara deponen dan peserta lainnya kerap memberikan gambaran yang lebih lengkap dan tepat mengenai masa lalu dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

142. PRK bisa memenuhi fungsi penting ini karena PRK memberi masyarakat kesempatan pertama untuk melihat pengalaman khusus mereka. Lebih jauh lagi, PRK memberi mereka kesempatan ini dalam lingkungan yang aman dan terkendali di mana mereka bisa membuka luka lama sebelum mereka menyatakan berdasarkan penyelesaian yang bisa diterima bahwa luka lama ini sekarang harus ditutup.

Sumbangan untuk upaya memberantas impunitas

143. Setelah konflik berakhir pada Oktober 1999 para pemimpin nasional dan wakil masyarakat internasional selalu mengatakan kepada masyarakat Timor-Leste bahwa mereka jangan membalas dendam dan harus mempercayakan penyelesaian pada sistem peradilan formal. Kepercayaan pada kekuasaan hukum ini masih asing bagi sebagian besar rakyat Timor-Leste karena selama pendudukan, hukum dipandang sebagai sarana penjajahan atau samasekali tidak relevan. Namun demikian, karena berbagai alasan, kemajuan yang dicapai dalam menegakkan keadilan sangat lambat selama tiga tahun setelah berakhirnya konflik. Kalau dilihat dari segi ini, sukses PRK merupakan contoh pentingnya kekuasaan hukum di negara baru ini. Khususnya, hal ini bisa terjadi karena program ini menjangkau sampai ke pelosok negeri ini dan banyak peserta mengatakan kepada Komisi bahwa PRK merupakan pengalaman mereka satu-satunya mengenai mekanisme hukum formal sejak militer Indonesia pergi.

144. Selain memperkuat kekuasaan hukum, PRK juga tetap meminta pertanggungjawaban kepada pelaku ‘tindakan merugikan’, yang mungkin tidak akan terjangkau hukum. Walaupun orang-orang ini tidak dipaksa menjalani proses peradilan atau menjalani hukuman penjara, pengalaman mereka mengikuti PRK dan ‘tindakan rekonsiliasi’ yang selanjutnya mereka lakukan sering sangat menyakitkan dan memalukan. Wawancara lanjutan menunjukkan bahwa pengakuan salah dan permintaan maaf dari para deponen punya pengaruh yang sangat dalam bagi kehidupan mereka.

145. Keberhasilan proses PRK dan semakin banyaknya jumlah kasus ‘kejahatan berat’ yang berhasil diadili oleh Panel Khusus menunjukkan bahwa pelaku kejahatan berat tidak lagi sepenuhnya kebal hukum. Proses ini juga menunjukkan bahwa amnesti tidak diperlukan untuk kejahatan di masa lalu. Anggota-anggota masyarakat yang mengikuti PRK merasa sulit menerima pendapat yang mengatakan bahwa amnesti merupakan satu-satunya cara untuk menangani kasus ‘kejahatan kurang berat’

yang tidak terpecahkan dan jumlahnya sangat banyak. Lebih jauh, usulan untuk menghentikan kasus terhadap pelaku kejahatan jenis tersebut kelihatan tidak adil karena pelaku lainnya harus mengikuti proses PRK yang menyakitkan.

Ketidakmampuan mengadili orang-orang yang paling bertanggung jawab

Kami hanya orang biasa. Kami dipaksa bergabung dengan milisi. Mengapa kita harus mengikuti proses ini sementara orang-orang yang paling bertanggung jawab masih bebas?

Dua saudara kami dibunuh dalam kekerasan itu. Pembunuhnya belum kembali dari Atambua. Waktu istri saya mengandung anak kami yang pertama, saya dipenjarakan di Timor Barat dari tahun 1997 sampai tahun 1999 karena saya terlibat gerakan klandestin. Saya dipukul berkali-kali dan tubuh saya dilempar ke laut. Sampai sekarang mata saya masih kabur dan saya tidak bisa melihat dengan jelas. Pada tahun 1999 rumah kami juga dibakar dan barang-barang kami dihancurkan.⁴⁰

Korban, Suai

146. Peraturan jelas melarang proses PRK menangani orang-orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan berat. Ada pandangan bahwa orang-orang ini bisa menghindari hukum dan mereka tetap bebas dan tidak menyesal. Rasa ketidakadilan ini dinyatakan secara berbeda-beda dalam setiap pertemuan PRK. Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta belum menampakkan hasilnya dan Proses Peradilan Kejahatan Berat tidak bisa menjangkau sebagian besar pelaku tindak kejahatan berat yang berada di Timor Barat atau di wilayah lain di Indonesia. Lebih jauh, karena keterbatasan sumberdaya, Unit Kejahatan Berat masih harus menyelidiki sejumlah orang yang disangka telah melakukan kejahatan berat dalam masyarakat, meskipun mereka telah kembali ke Timor-Leste. Dalam beberapa kasus, para pelaku tidak kembali ke desa mereka sendiri tetapi tinggal di Dili. Anggota-anggota masyarakat sering mengungkapkan frustrasi dan kemarahan karena para pelaku kejahatan belum juga dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

147. Bahkan di dalam golongan pelaku yang bisa ditangani melalui proses PRK, beberapa pelaku yang ditengarai melakukan 'kejahatan kurang berat' atau tindak pelanggaran lain memilih tidak ambil bagian dalam pertemuan PRK di desa mereka. Proses yang sifatnya sukarela berarti bahwa kalau pelaku memilih tidak memberikan pernyataan, mereka tidak bisa dipaksa. Meskipun menurut teorinya

.....
* Justice System Monitoring Programme, *Unfulfilled Expectations: Community Views on CAVR's Community Reconciliation Process*, Lia Kent, Dili, August 2004, p. 15. (tersedia di www.jsmp.minihub.org.) Ini bukan kutipan dari deponen tetapi JSMP melaporkan bahwa itu ialah "ucapan umum", terdengar dari para deponen di dalam PRK. Laporan JSMP mengungkap pula bahwa "persepsi yang ada adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab tetap hidup enak... dan kebal hukum, entah di Timor Barat atau sebagian juga di Timor Leste.

mereka masih bisa ditangkap dan diadili, kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil karena sistem peradilan formal mengalami kelebihan beban kasus-kasus baru.

148. Akibat dari perlakuan yang tidak sama ini masyarakat menghargai pelaku yang mau mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka, tetapi mereka jelas tidak puas dengan kekebalan hukum para pelaku kejahatan berat yang, karena alasan apapun, berada di luar jangkauan sistem peradilan formal.

Sumbangan PRK untuk penguatan kapasitas

149. Salah satu manfaat langsung PRK ialah keterampilan dan pengalaman dalam penyelesaian konflik dan mekanisme rekonsiliasi yang didapat oleh staf, panel, dan masyarakat melalui pelaksanaan program ini.

150. Semua staf PRK menjalani pelatihan sebelum melakukan pekerjaan mereka di masyarakat, dilengkapi dengan kursus-kursus lanjutan selama program berlangsung. Pelatihan dipusatkan pada pengembangan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pertemuan PRK. Keterampilan ini mencakup:

1. Mediasi
2. Mencari penyelesaian yang memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa
3. Membantu korban yang menderita
4. Hal-hal khusus berkaitan dengan korban kekerasan seksual
5. Penyelesaian konflik dan peredaan kemarahan atau kekerasan
6. Latihan memainkan peran dan memecahkan masalah berdasar pada jenis-jenis keadaan yang mungkin dihadapi staf dalam pertemuan PRK
7. Memimpin rapat atau panel
8. Prinsip-prinsip hukum dasar yang berhubungan dengan keadilan dan prosedur yang adil
9. Persyaratan hukum PRK, seperti yang disebutkan dalam Regulasi 10/2001

151. Selain pelatihan di atas, staf dan Komisaris Regional mengikuti berbagai pertemuan PRK selama program berlangsung, sehingga mereka bisa mengembangkan keterampilan tersebut. Sebanyak 50 orang Timor-Leste mengikuti pelatihan ini dan mereka dilengkapi dengan keterampilan yang bisa diterapkan secara lebih luas.

152. Para anggota panel juga mendapatkan pelatihan sebelum mereka memimpin pertemuan. Pelatihan ditujukan untuk mempersiapkan mereka memimpin pertemuan berikutnya, termasuk pengetahuan umum mengenai metode-metode mediasi dan penyelesaian konflik. Lebih daripada 1.000 anggota panel orang Timor-Leste mengikuti pelatihan ini dan menghadiri paling tidak satu pertemuan PRK di mana mereka diharuskan menggunakan keterampilan yang telah mereka pelajari. Karena anggota panel terdiri atas pemimpin masyarakat dari ke-65 subdistrik di Timor-Leste, pelatihan ini memperkuat kapasitas lokal untuk menyelesaikan konflik di seluruh Timor-Leste.

153. Metodologi PRK yang meliputi pelaksanaan pertemuan dalam suasana tenang dan saling menghargai serta memberikan kesempatan kepada semua pihak terkait untuk mengemukakan pandangan mereka, telah memberikan contoh yang berharga kepada masyarakat, yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan lainnya. Diperkirakan lebih daripada 40.000 orang Timor-Leste (hampir 5% dari seluruh penduduk) hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan PRK. Pengalaman yang dimiliki secara luas dalam menghadapi persoalan pelik dan mencari penyelesaian yang memuaskan semua pihak ini membantu memperkuat perdamaian dalam masa sulit dan penuh emosi setelah konflik berakhir.

154. Komisi selalu mengikuti ketentuan Regulasi bahwa paling tidak 30% anggota Komisaris Regional harus perempuan⁴¹ dan bahwa panel harus mempunyai “perimbangan keterwakilan gender”.⁴² Sebagai Komisaris Regional dan anggota panel, perempuan memainkan peran aktif dalam pertemuan-pertemuan PRK yang akan bermanfaat bagi kesetaraan gender di Timor-Leste.

PRK: Pendekatan keadilan yang unik

155. Sistem penuntutan formal yang berbeda melalui sistem hukum Negara dan program PRK dirancang untuk maksud yang berbeda dan memberikan sumbangan yang berbeda untuk keadilan. Sistem peradilan pidana formal telah berkembang selama berabad-abad untuk menangani jenis dan tingkat kejahatan biasa yang terjadi dalam masyarakat yang relatif stabil. Sistem ini menangani kasus-kasus secara satu per satu dengan cara obyektif dan anggapan bahwa keputusannya juga berlaku untuk pelaku-pelaku lain dari pelanggaran yang sama. Sistem peradilan formal merupakan kekuasaan Negara untuk menghukum perilaku antisosial.

156. Sebaliknya, PRK dibuat untuk menangani kasus-kasus tertentu yang muncul dari keadaan yang sangat khusus, di mana kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi dalam skala besar dan di mana seluruh masyarakat menjadi terpecah belah akibat dari kejadian-kejadian tersebut. Dalam konteks pascakonflik yang luarbiasa inilah PRK dirancang untuk menangani keadilan dan rekonsiliasi.

157. Tentu saja PRK tidak bisa melakukan penyelidikan, kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum, dan jaminan proses yang adil dengan bobot yang sama dengan pengadilan. Meskipun demikian, berbagai tradisi hukum dan tradisi lainnya yang dipersatukan dalam PRK memberinya dimensi yang tidak bisa ditemukan dalam sektor peradilan formal.

158. Dengan sumberdaya yang sama, PRK bisa menyelesaikan jauh lebih banyak kasus dibanding sektor peradilan formal. PRK juga mampu memusatkan perhatian pada pemulihan hubungan pribadi dan hubungan masyarakat dan memberikan sanksi yang sesuai untuk setiap kasus.

159. Banyak peserta menyatakan rasa senang bahwa pertemuan PRK diselenggarakan di desa mereka. Korban dan anggota masyarakat lainnya mendapatkan kesempatan berpartisipasi penuh. Sebaliknya, persidangan pengadilan biasanya

dilakukan di kota-kota dan penduduk desa yang menghadirinya menghadapi hambatan ekonomis, logistik, dan psikologis. Partisipasi masyarakat umum dan peran pemimpin *lisan*, pemimpin agama, dan tokoh-tokoh lain yang disegani, juga menambah kuatnya rasa memiliki proses PRK. Kesepakatan yang dicapai mendapatkan kekuatan dari semua tokoh lembaga-lembaga setempat yang dihormati ini dan dari hukum.

160. Dalam suatu persidangan pengadilan, korban bisa memberikan kesaksian atau tidak samasekali dan kalau mereka memberikan kesaksian, kesaksian mereka harus dibatasi pada apa yang mereka alami saja. Mereka tidak bisa mengemukakan pandangan mereka atau berbicara secara langsung kepada pelaku dan mengatakan kepadanya bagaimana mereka menderita karena perbuatan pelaku, mengajukan pertanyaan untuk meminta penjelasan kepada pelaku mengapa mereka melakukan kejahatan. Perasaan menyesal tidak ada hubungannya dengan bersalah atau tidaknya tertuduh, tetapi berkaitan dengan berat-ringannya hukuman. Apakah korban puas dengan penjelasan pelaku atau apakah mereka bisa menerima atau memaafkan pelaku itu, tidak relevan. Hanya pengacara yang diperbolehkan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan anggota masyarakat, yang bisa saja mengetahui dengan baik latar belakang terjadinya peristiwa, dilarang berbicara. Tetapi, dalam PRK semua faktor ini menjadi bagian yang normal dari prosedurnya.

161. Ikutserta dalam mekanisme peradilan formal sering merupakan pengalaman yang memalukan bagi korban. Mereka harus memberikan kesaksian seorang diri, dicecar pertanyaan, dan diperiksa kebenaran kesaksian mereka mengenai pengalaman mereka dan diharuskan mengingat kembali kenangan yang menyakitkan. Sebaliknya, korban yang mengikuti pertemuan PRK diberi kedudukan yang terhormat. Mereka disertai oleh keluarga dan teman serta staf dukungan CAVR yang terlatih. Korban bisa menyatakan perasaan mereka dan ikut memutuskan nasib pelaku. Korban-korban yang diwawancarai oleh CAVR menyatakan bahwa mereka merasa masyarakat sangat menghargai mereka setelah mengikuti PRK.

Pertemuan PRK di Holsa, Maliana, Bobonaro, 30 Juni 2003

Dari 1.371 deponen yang mengikuti pertemuan PRK selama 18 bulan, tidak seorangpun yang mempunyai cerita yang sama. Alasan berpartisipasi berbeda-beda, yang mencerminkan berbagai bentuk ketegangan di dalam masyarakat yang muncul karena konflik politik. Sebagian besar yang hadir menceritakan kerja sama mereka dengan rezim Indonesia dan milisi bentukan mereka dan sifat kerja sama tersebut bermacam-macam.

Kesaksian tiga deponen yang mengikuti pertemuan PRK di Desa Holsa, di pinggir kota Maliana, menunjukkan dengan jelas

berbagai cara orang bisa terlibat dalam konflik dan rumitnya proses penerimaan kembali mereka dalam masyarakat.

Pada awal pertemuan PRK yang terjadi pada akhir Juni 2003, dari penampilan deponen terlihat jelas perbedaan tertentu. JR, anggota polisi nasional Timor-Leste, datang memakai seragamnya, tetapi setelah diminta oleh Komisaris Regional, ia kemudian memakai pakaian sipil dan duduk tegak di salah satu ujung barisan tempat duduk khusus untuk pelaku pelanggaran. Di sebelahnya duduk JM, memakai *lipa* (sarung) dan berjenggot panjang yang menunjukkan bahwa ia seorang pemuka *lisan*. Di sisi lain duduk G, yang paling muda di antara mereka dan berpakaian tidak resmi kemeja dan celana *jeans*.

Orang yang pertama tampil dan berbicara adalah JR. Ia menjelaskan alasan mengapa ingin bersaksi dalam PRK. Sebelum Jajak Pendapat 1999 ia bertahun-tahun berdinasi dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan karena pengalaman kerja di Polri ini ia lulus penyingkiran untuk bekerja di Kepolisian Timor-Leste. Tetapi ia menyadari bahwa karena masa lalunya orang sulit menerimanya. Ia sering diejek pemuda lokal sebagai *polisi milisi*, yang secara tersirat menunjukkan bahwa sebagai bekas anggota Polri, ia terlibat dalam penyerangan oleh milisi dan kekerasan lainnya terhadap penduduk.

JR menceritakan bagaimana selama bertahun-tahun bekerja sebagai polisi Indonesia ia berusaha melindungi masyarakat tempatnya bekerja. Ia memberi tahu mereka kalau akan ada operasi militer atau polisi dan dengan sengaja tidak memberitahu atasannya tentang lokasi pejuang Falintil dan pendukung klandestin mereka. Dengan berpartisipasi dalam pertemuan PRK, JR berharap bisa membersihkan namanya sebagai kolaborator dan menjadi petugas polisi yang terhormat.

Setelah itu JM memberikan kesaksian. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah anggota masyarakat *lisan* dan inilah sebabnya mengapa ia menjadi sasaran kelompok milisi setempat Dadurus Merah Putih (DMP). Ia menceritakan bagaimana pada suatu malam di Mei 1999 dua orang bersenjata membawanya dari rumahnya ke rumah komandan DMP setempat. Ia diharuskan melakukan upacara *lisan* untuk milisi pukul 07.00 pagi hari berikutnya.

Keberatan JM tidak dihiraukan dan hari berikutnya ia menghadiri upacara, bersama dengan seorang suster setempat yang juga dipaksa hadir. Ia melakukan upacara yang diminta milisi. Upacara ini termasuk 'sumpah darah' untuk mengikatkan anggota milisi pada komandan mereka. JM mengisahkan bagaimana statusnya sebagai pemuka *lisan* lenyap setelah melakukan upacara suci untuk milisi, tetapi menyatakan bahwa dirinya tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti perintah mereka. Ia berharap bahwa dengan menjelaskan perbuatannya pada PRK, ia bisa diterima kembali oleh masyarakat *lisan* setempat.

Kesaksian terakhir adalah dari G. Ia menceritakan bagaimana, pada April 1999, ia dan temannya dipanggil oleh komandan batalion setempat untuk menghadiri apel di pos militer. Dalam apel itu, kepada mereka dikatakan bahwa mereka akan dilibatkan dalam operasi militer. Setelah apel selesai mereka pergi ke desa terdekat, Raimaten, dan di sana mereka diperintahkan membakar dua rumah. Yang membakar rumah tersebut adalah satu orang lain yang sekarang masih tinggal di Timor Barat. Setelah membakar rumah, beberapa anggota kelompok, termasuk wakil komandan batalion TNI setempat, mencuri harta benda milik penduduk lain. G menceritakan bagaimana komandan operasi menganggap dirinya dan temannya tidak cukup “galak” untuk ikut membakar rumah dan merampok. Ia bisa mengenali semua orang yang memerintahkan dan mengoordinasikan tindak kekerasan itu. Masyarakat sadar bahwa para pelaku sudah pergi ke Timor Barat setelah referendum dan tidak kembali. G ingin menghapus kecurigaan masyarakat bahwa ia terlibat aktif dalam pencurian dan pembakaran dua rumah itu. Ia menjawab semua pertanyaan dari korban dan peserta lainnya dan mereka puas dengan penjelasannya.

Ketiga deponen, meski berlatar belakang berbeda dan dengan alasan berbeda ikut proses PRK, semua merasa puas dengan hasil pertemuan PRK. Pemilik rumah yang dibakar menerima kesaksian G. Kesaksian JM yang menceritakan bagaimana ia dipaksa melakukan upacara *lisan* untuk milisi memungkinkan pemuka *lisan* yang lain untuk memahami alasan tindakannya dan memaafkan dirinya.

Pada hari pertemuan tidak jelas apakah kesaksian JR mengenai perannya sebagai anggota Polri meyakinkan hadirin. Meskipun demikian, saat diwawancarai staf Komisi beberapa bulan kemudian, ia mengatakan bahwa sikap masyarakat berubah menjadi baik setelah pertemuan PRK tersebut.

Refleksi

Kesimpulan

162. Program PRK dirancang untuk memenuhi kebutuhan mempersatukan komunitas-komunitas yang terpecah akibat konflik politik. Karena program seperti ini belum pernah ada sebelumnya, kemungkinan keberhasilannya masih belum dapat dipastikan ketika Regulasi dikeluarkan.

163. Dalam pelaksanaan program, muncul tantangan-tantangan logistik, administratif, pendidikan, politik, dan hukum. Tantangan-tantangan ini merentang

dari menjangkau desa-desa yang paling terpencil di negeri ini, menjalin hubungan kerja dengan Kejaksaan Agung dan pengadilan, menghalang dukungan dari para pemimpin lokal dan anggota masyarakat, sampai menangani pertikaian-pertikaian penuh emosi antara para pelaku dan korban. Semua tantangan ini berhasil dihadapi dengan kerja keras dan dedikasi yang luarbiasa dari para staf, penasihat, dan Komisaris CAVR.

164. Selain besarnya jumlah orang yang berhasil diintegrasikan kembali ke komunitasnya, PRK memberikan sejumlah manfaat lain. PRK menciptakan mekanisme bagi komunitas untuk memeriksa peran mereka dalam sejarah konflik dan mengklarifikasi peran pelaku dan korban dalam kejadian-kejadian tersebut.

- PRK memberikan kesempatan kepada komunitas-komunitas untuk merayakan akhir dari permusuhan dan perpecahan dan secara simbolis menutup konflik.
- PRK melatih sejumlah orang Timor-Leste, dari semua distrik, mengenai prinsip dan praktik mediasi dan menawarkan model penyelesaian pertikaian secara damai kepada puluhan ribu peserta.
- PRK memperkuat nilai kekuasaan hukum dan menyumbang untuk perjuangan melawan impunitas dengan menyelesaikan sejumlah besar kasus yang secara realistis tidak dapat ditangani melalui sistem peradilan formal.
- PRK membantu sistem peradilan formal untuk memperkokoh posisinya di masa pertumbuhannya yang rentan dengan membebaskannya dari beban untuk menangani banyak kasus yang belum diselesaikan.
- Bersama dengan program-program pelengkap yang lain, PRK mendorong sikap umum untuk mendukung permintaan maaf dan rekonsiliasi di antara anggota-anggota masyarakat.
- PRK memberikan pesan yang jelas kepada para pengungsi asal Timor-Leste di Timor Barat bahwa jika mereka kembali ke Timor-Leste, sudah ada mekanisme yang spesifik yang akan membantu mereka untuk reintegrasi dan bahwa masyarakat sangat mendukung pendekatan tanpa kekerasan ini untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan di masa lalu.

Pekerjaan yang tersisa

165. Komisi menyadari bahwa mekanisme peradilan transisi yang dibentuk menyusul kekerasan dan pergolakan besar-besaran tidak akan pernah bisa berharap memberikan penyelesaian untuk semua kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan. Timor-Leste, melalui kerja Unit Kejahatan Berat dan CAVR, sudah lebih berhasil dalam menemukan cara penanganan yang efektif dibandingkan negara-negara lain yang sedang menghadapi situasi yang sama. Walaupun demikian, sejumlah besar kasus yang samasekali belum diproses tetap menjadi hambatan untuk rekonsiliasi di Timor-Leste.

166. Dari tahap perencanaan awal PRK, Komite Pengarah menyadari bahwa Komisi tidak dapat menangani semua kasus 'kejahatan kurang berat' yang dilakukan antara April 1974 dan Oktober 1999. Komite menetapkan tujuan yang lebih sederhana, menyelesaikan proporsi yang berarti dari kasus-kasus ini, dan dengan demikian memberikan sumbangan untuk rekonsiliasi, meredakan kemarahan di dalam banyak komunitas, dan mencegah terjadinya serangan-serangan balas dendam.

167. Program ini telah mencapai tujuan ini, namun dengan demikian menciptakan pengharapan baru bahwa semua orang yang ingin ikutserta dalam PRK akan mendapatkan kesempatan mendaftar. Ini jelas tidak mungkin dalam jangka waktu Komisi harus menyelesaikan tugasnya. Walaupun ada target kurang-lebih 1.000 kasus individu dan penyelesaian aktualnya berjumlah hampir 1.400, Divisi PRK memperkirakan bahwa sedikitnya ada 3.000 pelaku lagi yang seharusnya dapat berpartisipasi dalam PRK, kalau saja program ini dapat dilanjutkan. Masyarakat merasa kecewa karena begitu banyak kasus yang seharusnya dapat ditangani melalui PRK tidak tertangani, dan sangat menginginkan perpanjangan waktu untuk program tersebut atau menggantinya dengan sesuatu yang serupa.

168. Satu bidang lain yang belum diselesaikan adalah lebih daripada 100 kasus yang ditangguhkan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung telah memutuskan bahwa kasus-kasus ini harus diselidiki lebih jauh karena ada bukti-bukti, baik dalam berkas-berkas Kejaksaan Agung, pernyataan deponen, atau dari pertemuan PRK, mengindikasikan adanya keterlibatan dalam suatu kejahatan berat.*

169. Unit Kejahatan Berat terus berjuang keras menangani kasus-kasus yang sangat banyak dan saat Laporan ini selesai dibuat, Kejaksaan Agung belum melanjutkan pemeriksaan pernyataan-pernyataan deponen PRK yang ditangguhkan. Jika pada akhirnya Kejaksaan Agung tidak menemukan alasan-alasan untuk melanjutkan kasus-kasus ini, pengalihan kasus-kasus ini dari PRK telah membuat para pelaku yang ingin berpartisipasi dalam PRK kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masalah masa lalu mereka dengan komunitas atau untuk memberikan informasi tambahan yang mengklarifikasi keterlibatan mereka.

170. Kekurangan sumberdaya Unit Kejahatan Berat menimbulkan imbas yang lebih luas pada kerja PRK. Unit Kejahatan Berat membatasi penyelidikan dan pengadilan terhadap kejahatan yang dilakukan pada 1999. Pada saat penulisan laporan ini Unit Kejahatan Berat telah menyelesaikan kurang dari setengah dari seluruh kasus kejahatan berat yang dilaporkan dan diperkirakan menghentikan operasinya pada Mei 2005.† Akibatnya, mayoritas besar pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama periode konflik politik tersebut belum ditangani dengan cara apapun. Kenyataan bahwa banyak pelaku telah berpartisipasi secara sukarela dalam

* Jika bukti itu disampaikan pada suatu pertemuan PRK, Regulasi mengharuskan bahwa pertemuan ditangguhkan dan kasusnya dikembalikan ke Kejaksaan Agung (Regulasi 10/2001, pasal 27.5).

† Sementara persiapan-persiapan sedang dilakukan untuk menyerahkan Laporan Akhir ini kepada Presiden Timor-Leste pada Juli 2005, PPB telah menyampaikan Moratorium tentang penutupan Unit Kejahatan Berat, menunggu pertimbangan laporan dari Komisi Ahli.

pertemuan PRK yang sering menyedihkan dan memalukan, sementara mereka yang bersalah atas kejahatan-kejahatan yang lebih berat tampaknya tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban, telah menciptakan situasi pertanggungjawaban yang timpang dan anggapan tentang defisit keadilan. Ketidakseimbangan ini dan faktor-faktor kelembagaan yang mendasarinya harus diatasi ketika membahas strategi dan kebutuhan di masa mendatang dalam bidang rekonsiliasi dan keadilan.

Masa depan PRK

171. Keberhasilan program PRK menimbulkan banyak perdebatan mengenai apakah program tersebut harus dilanjutkan, baik dalam format yang sudah ada atau dalam format lain. Pada saat PRK dirancang, tidak jelas apakah komunitas akan menerimanya. Hasil-hasilnya menunjukkan dengan jelas bahwa komunitas di seluruh Timor-Leste menganggap PRK sangat berharga dan pada akhir periode operasionalnya ada banyak permintaan yang belum terpenuhi proses tersebut.

172. Pada 7 Juli 2004, Komisi mengadakan lokakarya satu hari dengan judul “Menyelesaikan Masa Lalu untuk Menyongsong Masa Depan”. Lokakarya tersebut mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan untuk membantu perkembangan rekonsiliasi di masa depan. Di antara peserta lokakarya hadir anggota-anggota Parlemen Nasional, hakim, pengacara, wakil LSM lokal dan internasional, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan juga para Komisaris Nasional CAVR.

173. Kesimpulan dan rekomendasi utama lokakarya adalah sebagai berikut:

- Proses rekonsiliasi yang berbasis komunitas harus dilanjutkan. Penerus program PRK harus berfokus pada penyelesaian kejahatan kurang berat dan dalam tujuan dasarnya harus memasukkan pemulihan serta perbaikan hubungan komunitas
- PRK telah berperan sebagai model reintegrasi anggota-anggota komunitas yang telah melakukan ‘tindakan merugikan’ pada 1999. Permintaan atas layanan yang diberikan oleh PRK kepada kelompok ini akan tetap besar, yang datang dari para pelaku yang telah kembali ke Timor-Leste dan mereka yang belum kembali. Lokakarya tersebut merekomendasikan bahwa kasus-kasus yang timbul dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 1999 harus ditangani secara terpisah dari kasus-kasus yang terjadi antara 1974 dan 1998
- Pemerintah harus mendirikan lembaga yang mandiri untuk memfasilitasi proses-proses rekonsiliasi komunitas setelah CAVR. Lembaga yang melakukan pekerjaan ini harus bekerja dalam suatu kerangka kerja yang tujuan dan tanggungjawabnya diuraikan dengan jelas. Secara umum telah disetujui bahwa sistem dan *modus operandi* PRK merupakan contoh tentang bagaimana program penerus PRK dapat dilaksanakan.
- Inisiatif rekonsiliasi komunitas apapun berikutnya harus mempertahankan hubungan antara sistem peradilan *lisan* dan peradilan formal.⁴³

174. Sudah jelas bahwa kuat permintaan dari bawah masyarakat untuk kelanjutan PRK dan bahwa ada tekad di banyak sektor di dalam masyarakat bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi. Kendala utama untuk melaksanakannya sebagian besar bersifat kelembagaan—termasuk pencarian induk lembaga yang sesuai di mana pekerjaan PRK dapat dilaksanakan dan perumusan kembali hubungan antara lembaga pengganti ini dengan sistem peradilan formal ketika penuntutan ‘kejahatan berat’ di masa mendatang tidak jelas nasibnya. Rekomendasi-rekomendasi Komisi dalam bidang ini ada dalam Bagian 12: Kesimpulan dan Rekomendasi.

Catatan Akhir

1. Peter Mares, Wawancara dengan Xanana Gusmão untuk “Priorities for the New Nation,” ABC Radio Asia Pacific (Australia), 10 Oktober 2001.
2. Regulasi Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (UNTAET) No. 10/2001 tentang Pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor-Leste, 13 Juli 2001.
3. Seperti yang disebutkan dalam Regulasi UNTAET No. 10/2001, pasal 1 (g).
4. Dolan, C., Large, J. dan Obi, N., *Evaluation of UNHCR’s Repatriation and Reintegration Programme in East Timor, 1999-2003*, Geneva: UNHCR, Evaluation and Policy Analysis Unit, Februari 2004, p. 12.
5. East Timor National NGO Forum Working Group on Refugees and Returnees. A Letter to Ruud Lubbers (Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi), Dili, 8 September 2001.
6. Regulasi UNTAET No. 15/2000 6 Juni 1000, pasal 1.1.
7. Pastor Jovito Araújo, Wakil Ketua CAVR, 9 Maret 2005.
8. Dionisio Babo Soares, *A Brief Overview of the Role of Customary Law in East Timor*, makalah disampaikan pada Simposium tentang Timor-Leste, Indonesia, dan Kawasan, diselenggarakan dan disponsori oleh Universidade Nova de Lisboa, Portugal, 1999, halaman 11.
9. Tanja Hohe dan Rod Nixon, *Reconciling Justice: ‘Traditional’ Law and State Judiciary in East Timor*, Laporan Akhir disusun untuk United States Institute of Peace, Januari 2003, halaman 20-23; lihat juga Dionisio Babo Soares, *Nahe Biti: The Philosophy and Process of Grassroots Reconciliation (and Justice) in East Timor*, makalah untuk konferensi “Jalan Menuju Perdamaian,” Bergen, Norwegia, 11-12 April 2001.
10. “Establishing a Commission for Truth, Reception and Reconciliation in East Timor: Operating Principles and Mandate,” Makalah konsep disampaikan kepada Unit Hak Asasi Manusia UNTAET, 2 November 2000, mengutip laporan lokakarya.
11. Reg. 10/2001, pasal 22. 1.
12. Reg. 10/2001, pasal 23.
13. Reg. 10/2001, Lampiran 1, sebagaimana yang diamandemen dengan Petunjuk tentang Kejahatan Berat, 9/2002.
14. Reg. 10/2001, Lampiran 1, sebagaimana yang diamandemen dengan Petunjuk tentang Kejahatan Berat, 9/2002.
15. Reg. 10/2001, pasal 24.7-24.8.
16. Diambil dari memo Kejaksaan Agung – “Kasus Yang Dikirimkan kepada Kejaksaan Agung untuk Diperiksa.”
17. Diambil dari memo Kejaksaan Agung – “Kasus Yang Dikirimkan kepada Kejaksaan Agung untuk Diperiksa.”
18. Reg. 10/2001, pasal 25.
19. Reg. 10/2001, pasal 26.1.

20. Reg. 10/2001, pasal 27.1.
21. Reg. 10/2001, pasal 27.3.
22. Reg. 10/2001, pasal 27.2.
23. Reg. 10/2001, pasal 27.4.
24. Reg. 10/2001, pasal 27.5.
25. Reg. 10/2001, pasal 27.6.
26. Reg. 10/2001, pasal 27.7.
27. Reg. 10/2001, pasal 32.
28. Reg. 10/2001, pasal 30.2.
29. Komisaris Regional CAVR Distrik Oecussi.
30. CAVR, wawancara-wawancara dilakukan selama peninjauan internal PRK 2004.
31. Judicial System Monitoring Programme (JSMP), *Unfulfilled Expectation: Community Views on CAVR's Community Reconciliation Process*, Lia Kent Dili, Timor-Leste, Agustus 2004, halaman 14.
32. CAVR, wawancara-wawancara dilakukan selama peninjauan internal PRK 2004.
33. CAVR, wawancara-wawancara dilakukan selama peninjauan internal PRK 2004.
34. Ruth Hubscher, catatan tentang wawancara-wawancara disampaikan kepada CAVR, Juni 2004.
35. JSMP, Kent 2004, halaman 15-16.
36. Komentar dari penjelasan untuk deponen PRK, Hera, Dili, November 2002.
37. Dari wawancara yang dilakukan oleh Lia Kent, 2004, diserahkan kepada CAVR.
38. Audiensi Publik tentang Konflik Politik Internal, di Kantor Nasional CAVR, Comarca, Dili, 15-18 Desember 2003.
39. Pemuka masyarakat, pidato diberikan pada pertemuan PRK di Maliana, Distrik Bobonaro, November 2003.
40. Diambil dari wawancara oleh konsultan Lia Kent, 2004, diserahkan kepada CAVR.
41. Reg. 10/2001 pasal 11.1.
42. Reg. 10/2001 pasal 26.1.
43. CAVR, Rekomendasi Penting dari Lokakarya CAVR, Menyelesaikan Masa Lalu untuk Menyambut Masa Depan, Dili, 7 Juli 2004.

Chega! merupakan sebuah kesaksian yang meresahkan. Laporan ini akan menyentak para pembaca Indonesia yang mengira bahwa di bawah rezim Soeharto semuanya berjalan damai di provinsi Indonesia ke-27 saat itu. Halaman demi halaman kita dapat membaca cerita-cerita korban pembantaian, perkosaan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan berbagai kejahatan yang tidak terbayangkan. ...[M]asyarakat di Indonesia dapat belajar dari ***Chega!*** Berkat penerbitan laporan ini oleh KPG, pembelajaran tersebut menjadi dimungkinkan. Laporan ini adalah suatu kontribusi penting ke arah demokratisasi di Indonesia dan reformasi sektor keamanannya..

Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM

Laporan CAVR adalah ensiklopedi sejarah kita, yang kaya baik dalam hal ajaran juga penderitaan. Kita harus memanfaatkan ajarannya yang luar biasa untuk... mencegah krisis di masa depan.

Jose Ramos-Horta,
Penerima Anugrah Nobel Perdamaian, Presiden Timor-Leste

Sosialisasi ***Chega!*** penting sekali bagi rakyat Timor-Leste maupun Indonesia agar rakyat kedua belah pihak tahu apa yang sesungguhnya terjadi.

Ade Rostina Sitompul,
pejuang Hak Asasi Manusia

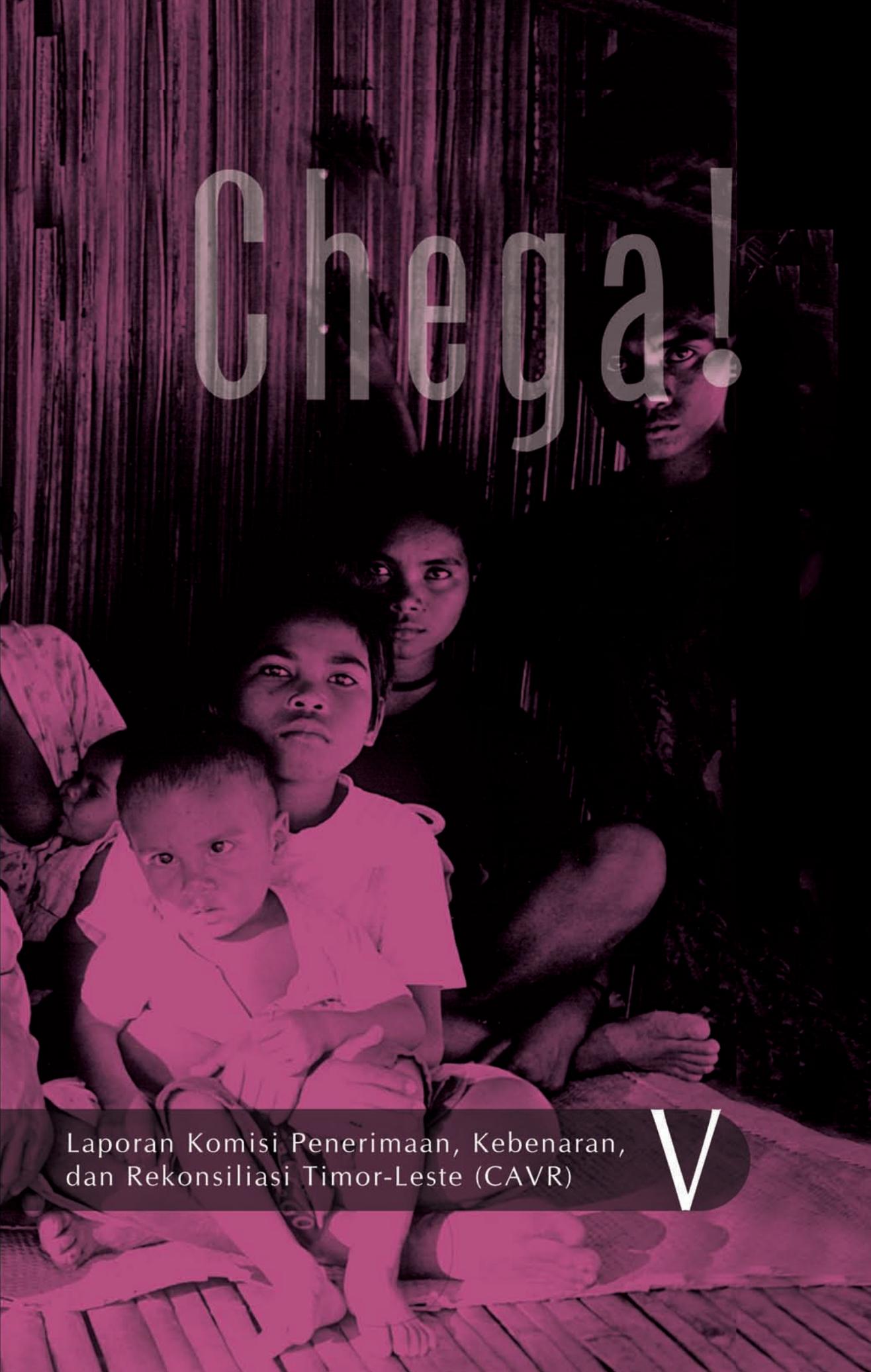
Laporan CAVR menandakan sebuah titik tonggak... Harapan tulus saya adalah agar (laporan) ini menjadi kontribusi tanpa henti untuk membangun bangsa Timor dan akan mencegah berulangnya peristiwa tragis di Timor-Leste dan tempat lain.

Kofi Annan,
mantan Sekretaris Jenderal PBB

KPG (KEPUSTAKAAN POPULER GRAMEDIA)
Gedung Kompas Gramedia, Blok 1 Lt. 3
Jl. Palmerah Barat 29 - 37, Jakarta 10270
Telp. 021-5365 0110, 5365 0111 ext. 3362-3364
Fax. 021-5369 8044



Chega!



Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR)



Chega!

V o l u m e V:
Lampiran

TERBITAN CAVR LAINNYA:

Buku-buku Audiensi Publik:

Penahanan politik
Perempuan dan konflik
Pemindahan paksa dan kelaparan
Pembantaian
Konflik politik internal 1974 – 1976
Penentuan nasib sendiri dan masyarakat internasional
Anak dan konflik

Buku-buku lain:

Rona Ami-Nia Lian (Dengarkan suara kami)
Penjara Comarca Balide: Sebuah 'Gedung Sakral'
Laporan Eksekutif Chega!

Video dan radio dokumenter:

Dalan ba Dame (Jalan Menuju Perdamaian)

<http://www.cavr-timorleste.org>

info@cavr-timorleste.org

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

V o l u m e V:
Lampiran

JAKARTA
KPG

Chega!

**Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste**

Volume V: Lampiran

KPG: 950 04 10 0342

Cetakan pertama, Agustus 2010

Penyusun:

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

Foto sampul:

Poriaman Sitanggang

Pembaca akhir:

Rani Elsanti

Desain dan tata letak:

M. Roniyadi

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

**Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di
Timor-Leste - Volume V**

Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2010

xii + 644 hlm; 150x230 mm

ISBN-13: 978-979-91-0248-5

Penerbitan buku ini didanai oleh Pemerintah Irlandia dan Jerman

Dicetak oleh PT Gramedia, Jakarta.

Isi di luar tanggungjawab percetakan.

Daftar isi

- 2929** | **Lampiran 1: Timor-Leste 1999:
Kejahatan terhadap kemanusiaan —
Laporan Pesanan Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia
Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR)**
- 2929** | **Prakata**
- 2933** | **Ringkasan Eksekutif**
- 2934** | Metode dan mandat
 - 2935** | Kerangka dan kesimpulan
- 2937** | **Konteks sejarah dan politik**
- 2937** | Invasi dan pendudukan Indonesia
 - 2940** | Resistansi
 - 2942** | Tanggapan internasional
 - 2945** | Terobosan di Indonesia
 - 2946** | UNAMET dan Jajak Pendapat
- 2950** | **Indonesia: kekuasaan dan strategi**
- 2951** | Tentara Nasional Indonesia
 - 2956** | Milisi
 - 2958** | Kepolisian Indonesia
 - 2959** | Pemerintah sipil dan kampanye sosialisasi
 - 2962** | Kelompok-kelompok politik pro-otonomi
 - 2963** | Badan-badan khusus bentukan pemerintah
- 2965** | **Pelanggaran, korban, dan pelaku**
- 2966** | Jenis-jenis pelanggaran
 - 2971** | Kronologi kekerasan: Tiga periode
 - 2975** | Korban
 - 2981** | Pelaku
- 2984** | **Pola dan variasi**
- 2984** | Variasi sementara – Menutup Keran
 - 2990** | Ketakbertindakan dan keterlibatan polisi
 - 2994** | *Modus Operandi* Milisi
 - 2997** | Variasi geografis
- 3002** | **Enam Dokumen Kunci**
- 3002** | Operasi Pembersihan
 - 3004** | Dokumen Tavares
 - 3006** | Dokumen Garnadi

- 3008 | Telegram Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur
- 3009 | Operasi Cabut

- 3014 | Milisi: Sejarah, pembentukan, dan pengakuan hukum
 - 3014 | Pola Historis
 - 3020 | Pembentukan milisi
 - 3026 | Pengakuan politik dan hukum

- 3032 | Milisi: Perekrutan, pelatihan, operasi, dan senjata
 - 3032 | Perekrutan dan keanggotaan
 - 3035 | Pelatihan
 - 3038 | Operasi
 - 3041 | Senjata: Bukti kesaksian
 - 3046 | Senjata: Bukti dokumenter

- 3050 | Milisi: Pendanaan dan dukungan material
 - 3050 | 'Sosialisasi' dan pendanaan milisi
 - 3054 | Sumber pendanaan pemerintah
 - 3059 | Pendanaan dan dukungan material TNI
 - 3063 | FPKD sebagai saluran pendanaan
 - 3065 | Anggaran milisi

- 3068 | Ringkasan kabupaten
 - 3068 | Aileu (Kodim 1632)
 - 3071 | Ainaro (Kodim 1633)
 - 3075 | Baucau (Kodim 1628)
 - 3079 | Bobonaro (Kodim 1636)
 - 3086 | Covalima (Kodim 1635)
 - 3090 | Dili (Kodim 1627)
 - 3097 | Ermera (Kodim 1637)
 - 3102 | Lautém (Kodim 1629)
 - 3107 | Liquiçá (Kodim 1638)
 - 3114 | Manatuto (Kodim 1631)
 - 3119 | Manufahi (Kodim 1634)
 - 3123 | Oecussi (Kodim 1639)
 - 3125 | Viqueque (Kodim 1630)

- 3129 | Studi kasus: Insiden utama Hak Asasi Manusia
 - 3130 | Pembantaian di Gereja Liquiçá (6 April 1999)
 - 3135 | Pembunuhan di Cailaco (12 April 1999)
 - 3139 | Pembantaian di rumah Carrascalão (17 April 1999)
 - 3145 | Pembunuhan dua mahasiswa di Hera (20 Mei 1999)
 - 3146 | Penahanan sewenang-wenang dan pemerkosaan di Lolotoe (Mei-Juni 1999)
 - 3149 | Penyerangan terhadap UNAMET Maliana (29 Juni 1999)

- 3152** | Penyerangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan (4 Juli 1999).
- 3157** | Pembunuhan Staf UNAMET di Boboe Leten (30 Agustus 1999)
- 3161** | Pemindahan paksa dan pembunuhan pengungsi di Dili (5-6 September 1999)
- 3165** | Pembantaian di Gereja Suai (6 September 1999)
- 3170** | Pembantaian di Kantor Polisi Maliana (8 September 1999)
- 3175** | Pembantaian di Passabe dan Maquelab (September-Oktober 1999)
- 3178** | Pemerksaan dan pembunuhan Ana Lemos (13 September 1999)
- 3182** | Amukan Batalion 745 (20-21 September 1999)
- 3187** | Pembunuhan rohaniwan Los Palos (25 September 1999)

- 3190** | Tanggungjawab individual dan komando
 - 3191** | Tanggungjawab pidana individual
 - 3195** | Tanggungjawab komando

- 3207** | Tanggungjawab internasional
 - 3208** | Tanggungjawab internasional
 - 3214** | Tanggungjawab PBB: Masalah keadilan

- 3246** | Catatan tentang sumber
- 3247** | Catatan tentang penulis

3249 | Lampiran 2: Data dan metode statistik

- 3255** | Pendahuluan
 - 3255** | Relevansi dari analisis data empiris terhadap mandat Komisi

- 3257** | Sumber-sumber data
 - 3257** | Human Rights Violations Database (HRVD)
 - 3265** | Retrospective Mortality Survei (RMS)
 - 3269** | Graveyard Census Database (GCD)

- 3270** | Gambaran metodologis tentang teknik-teknik penyuntingan data, pembersihan, dan normalisasi nama
 - 3270** | Pembersihan dan penyuntingan basis data
 - 3271** | Penyuntingan dan pembersihan tanggal
 - 3271** | Penyuntingan dan pembersihan usia
 - 3272** | Penyuntingan dan pembersihan kode-kode pelanggaran dan hubungan
 - 3272** | Penyuntingan dan pembersihan kode lokasi geografis
 - 3272** | Deduplikasi pemakaman dan makam GCD
 - 3273** | Proses-proses pembersihan nama-nama

- 3277** | Konversi data

- 3278 | Tinjauan pertalian catatan (*record linkage*)
 - 3279 | Aturan-aturan pencocokan
 - 3282 | Pencocokan intra-sistem
 - 3286 | Pencocokan Antarsistem

- 3290 | Pengolahan data pelanggaran yang dilaporkan melibatkan kelompok-kelompok korban tak dikenal

- 3291 | Teknik-teknik perkiraan statistik yang digunakan dalam analisis pelanggaran fatal dan pemindahan
 - 3291 | Kalkulasi beban RMS
 - 3293 | Penentuan tanggal RMS untuk analisa pemindahan
 - 3293 | Penyesuaian beban RMS untuk perkiraan angka kematian
 - 3295 | Analisis sensitivitas terhadap asumsi-asumsi dalam pengukuran kembali angka kematian (*mortality re-weighting*)
 - 3296 | *Multiple System Estimation (MSE)*: motivasi dan teori
 - 3299 | Mengalokasikan GCD menurut jenis kematian
 - 3300 | Analisis sensitivitas hilangnya pengetahuan sosial: penyesuaian-penyesuaian untuk perkiraan yang terlalu rendah

3311 | Lampiran 3: Ringkas dakwaan

- 3312 | Kesimpulan tuduhan/dakwaan menurut distrik
 - 3312 | Aileu
 - 3313 | Ainaro
 - 3315 | Baucau
 - 3316 | Bobonaro
 - 3326 | Covalima
 - 3334 | Dili
 - 3340 | Ermera
 - 3342 | Lautém
 - 3345 | Liquiçá
 - 3347 | Manatuto
 - 3348 | Manufahi
 - 3350 | Oecussi
 - 3355 | Viqueque
 - 3356 | Timor Barat

3356 | Dakwaan nasional

..... 3359 | Lampiran 4: Ucapan terima kasih

3359 | Pendahuluan

3360 | Donor

3361 | Masukan

3362 | Peserta Audiensi Publik Nasional

3366 | Komunitas CAVR

3383 | Mereka yang memberi pernyataan pada CAVR

3383 | Mereka yang berpartisipasi dalam PRK

3383 | Peserta lokakarya pemulihan

..... 3389 | Daftar istilah dan singkatan

..... 3404 | Indeks

Daftar tabel:

- 3222** | Perwira dan pejabat senior yang diduga mengemban tanggung jawab individual dan komando untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste, 1999
- 3225** | Perwira dan pejabat penting pada 1999 (berdasarkan urutan abjad)
- 3228** | Kelompok milisi pro-Indonesia di Timor-Leste, 1999
- 3081** | Kelompok milisi pro-Indonesia di Kabupaten Bobonaro
- 3229** | PBB dan Timor-Leste
- 3260** | Tabel pernyataan yang diberikan, relatif terhadap jenis kelamin pemberi pernyataan
- 3264** | Matriks pencatatan perhitungan untuk Basis Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HRVD)
- 3268** | Daftar *aldeia* yang tidak dihitung dalam pengambilan sampel
- 3274** | Contoh penulisan nama Portugis orang Timor-Leste
- 3274** | Contoh penulisan nama asli orang Timor-Leste
- 3278** | Perhitungan total yang tercatat oleh basis data sebelum dan sesudah pembersihan
- 3288** | Matriks hasil pencocokan antarsistem
- 3289** | Tabel total pencatatan perhitungan pencocokan antarsistem dan persentase pelanggaran fatal menurut pasangan set data
- 3291** | Tingkat duplikasi di antara korban-kelompok
- 3299** | Tabel perkiraan proporsi kematian, menurut periode dan cara kematian

Daftar grafik:

- 3258** | Jumlah pernyataan yang diberikan, berdasarkan distrik
- 3259** | Jumlah pernyataan, berdasarkan usia dan jenis kelamin pemberi pernyataan
- 3302** | Perkiraan kasar tingkat kematian bagi Timor-Leste
- 3302** | Perkiraan total kematian akibat kelaparan dan penyakit di Timor-Leste (berdasarkan MSE)
- 3303** | Perkiraan total kematian akibat kelaparan dan penyakit di Timor-Leste (berdasarkan RMS)



Lampiran 1:
Timor-Leste 1999:
Kejahatan terhadap kemanusiaan –
Sebuah laporan yang dibuat berdasarkan pesanan
Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia
Perserikatan Bangsa-Bangsa

Oleh Geoffrey Robinson,
University of California, Los Angeles (UCLA)

Geoffrey Robinson membuat sedikit perubahan pada laporan yang ditulisnya pada 2003 ini, saat mempersiapkan penerbitan versi bahasa Indonesianya oleh LSM Timor-Leste, Yayasan HAK, pada 2007. Untuk menghindari kebingungan, versi HAK terbaru itulah yang dilampirkan di sini.

Timor-Leste 1999: Kejahatan terhadap kemanusiaan – Laporan Pesanan Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR)

2929 | Prakata

2933 | Ringkasan eksekutif

2934 | Metode dan mandat

2935 | Kerangka dan kesimpulan

2937 | Konteks sejarah dan politik

2937 | Invasi dan pendudukan Indonesia

2940 | Resistansi

2942 | Tanggapan internasional

2945 | Terobosan di Indonesia

2946 | UNAMET dan Jajak Pendapat

2950 | Indonesia: kekuasaan dan strategi

2951 | Tentara Nasional Indonesia

2956 | Milisi

2958 | Kepolisian Indonesia

2959 | Pemerintah sipil dan kampanye sosialisasi

2962 | Kelompok-kelompok politik pro-otonomi

2963 | Badan-badan khusus bentukan pemerintah

2965 | Pelanggaran, korban, dan pelaku

2966 | Jenis-jenis pelanggaran

2966 | Pembunuhan di luar hukum

2967 | Penyiksaan dan penganiayaan

2967 | Kekerasan berbasis gender

2968 | Pemandahan penduduk secara paksa

2970 | Penghancuran harta benda

2971 | Kronologi kekerasan: Tiga periode

2971 | Periode pra-UNAMET (Januari hingga akhir Mei)

2972 | Periode UNAMET (awal Juni hingga 30 Agustus)

2973 | Periode setelah pemungutan suara (30 Agustus hingga akhir Oktober)

- 2975 | Korban
 - 2976 | Pemimpin CNRT
 - 2976 | Pejabat lokal
 - 2976 | Orang-orang yang dianggap pengkhianat
 - 2977 | Penduduk biasa
 - 2977 | Para rohaniawan
 - 2978 | Mahasiswa dan pemuda
 - 2978 | Staf lokal UNAMET
 - 2978 | Kaum perempuan dewasa dan muda
 - 2979 | Anak-anak
 - 2979 | Staf internasional dan wartawan internasional
 - 2980 | Tokoh pro-otonomi dan milisi
- 2981 | Pelaku
 - 2981 | Milisi
 - 2981 | Militer
 - 2982 | Polisi
 - 2983 | Falintil

..... 2984 | Pola dan variasi

- 2984 | Variasi sementara – Menutup Keran
- 2990 | Ketakbertindakan dan keterlibatan polisi
- 2994 | *Modus Operandi* Milisi
- 2997 | Variasi geografis

..... 3002 | Enam Dokumen Kunci

- 3002 | Operasi Pembersihan
- 3004 | Dokumen Tavares
- 3006 | Dokumen Garnadi
- 3008 | Telegram Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur
- 3009 | Operasi Cabut

..... 3014 | Milisi: Sejarah, pembentukan, dan pengakuan hukum

- 3014 | Pola Historis
- 3020 | Pembentukan milisi
- 3026 | Pengakuan politik dan hukum

..... **3032** | Milisi: Perekrutan, pelatihan, operasi dan senjata

3032 | Perekrutan dan keanggotaan

3035 | Pelatihan

3038 | Operasi

3041 | Senjata: Bukti kesaksian

3046 | Senjata: Bukti dokumenter

..... **3050** | Milisi: Pendanaan dan dukungan material

3050 | 'Sosialisasi' dan pendanaan milisi

3054 | Sumber pendanaan pemerintah

3059 | Pendanaan dan dukungan material TNI

3063 | FPKD sebagai saluran pendanaan

3065 | Anggaran milisi

..... **3068** | Ringkasan kabupaten

3068 | Aileu (Kodim 1632)

3069 | Milisi dan pihak berwenang

3070 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

3071 | Ainaro (Kodim 1633)

3071 | Milisi dan pihak berwenang

3074 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

3075 | Baucau (Kodim 1628)

3076 | Milisi dan pihak berwenang

3078 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

3079 | Bobonaro (Kodim 1636)

3080 | Milisi dan pihak berwenang

3082 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

3086 | Covalima (Kodim 1635)

3086 | Milisi dan pihak berwenang

3087 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

3090 | Dili (Kodim 1627)

3090 | Milisi dan pihak berwenang

3092 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

3097 | Ermera (Kodim 1637)

3097 | Milisi dan pihak berwenang

3100 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

- 3102 | Lautém (Kodim 1629)
 - 3103 | Milisi dan pihak berwenang
 - 3104 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
- 3107 | Liquiçá (Kodim 1638)
 - 3107 | Milisi dan pihak berwenang
 - 3110 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
- 3114 | Manatuto (Kodim 1631)
 - 3115 | Milisi dan pihak berwenang
 - 3117 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
- 3119 | Manufahi (Kodim 1634)
 - 3120 | Milisi dan pihak berwenang
 - 3121 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
- 3123 | Oecussi (Kodim 1639)
 - 3123 | Milisi dan pihak berwenang
 - 3124 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia
- 3125 | Viqueque (Kodim 1630)
 - 3126 | Milisi dan pihak berwenang
 - 3128 | Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

..... 3129 | Studi kasus: Insiden utama Hak Asasi Manusia

- 3130 | Pembantaian di Gereja Liquiçá (6 April 1999)
- 3135 | Pembunuhan di Cailaco (12 April 1999)
- 3139 | Pembantaian di rumah Carrascalão (17 April 1999)
- 3145 | Pembunuhan dua mahasiswa di Hera (20 Mei 1999)
- 3146 | Penahanan sewenang-wenang dan pemerkosaan di Lolotoe (Mei-Juni 1999)
- 3149 | Penyerangan terhadap UNAMET Maliana (29 Juni 1999)
- 3152 | Penyerangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan (4 Juli 1999)
- 3157 | Pembunuhan Staf UNAMET di Boboe Leten (30 Agustus 1999)
- 3161 | Pemindahan paksa dan pembunuhan pengungsi di Dili (5-6 September 1999)
- 3165 | Pembantaian di Gereja Suai (6 September 1999)
- 3170 | Pembantaian di Kantor Polisi Maliana (8 September 1999)
- 3175 | Pembantaian di Passabe dan Maquelab (September-Oktober 1999)
- 3178 | Pemerkosaan dan pembunuhan Ana Lemos (13 September 1999)
- 3182 | Amukan Batalion 745 (20-21 September 1999)
- 3187 | Pembunuhan rohaniwan Los Palos (25 September 1999)

..... **3190** | Tanggung jawab individual dan komando

3191 | Tanggung jawab pidana individual

3193 | Manajer dan perencana

3195 | Tanggung jawab komando

3196 | Hubungan atasan-bawahan

3201 | "Mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui"

3203 | "Tindakan yang diperlukan dan mencukupi"

..... **3207** | Tanggung jawab internasional

3208 | Tanggung jawab internasional

3214 | Tanggung jawab PBB: Masalah keadilan

..... **3246** | Catatan tentang sumber

..... **3247** | Catatan tentang penulis

Daftar tabel:

3222 | **Tabel 1** : Perwira dan pejabat senior yang diduga mengemban tanggung jawab individual dan komando untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste, 1999

3225 | **Tabel 2** : Perwira dan pejabat penting pada 1999 (berdasarkan urutan abjad)

3228 | **Tabel 3** : Kelompok milisi pro-Indonesia di Timor-Leste, 1999

3081 | **Tabel 4** : Kelompok milisi pro-Indonesia di Kabupaten Bobonaro

3229 | **Kronologi** : PBB dan Timor-Leste

Lampiran 1:

Timor-Leste 1999: Kejahatan terhadap kemanusiaan

– Laporan Pesanan Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR)

Prakata

Setelah kemenangan kemerdekaan Timor-Leste dalam pemungutan suara yang bersejarah pada Agustus 1999, pendukung-pendukung kekuasaan Indonesia membuat negeri itu menjadi puing-puing hangus. Pada akhir Oktober, sekitar 1.500 orang telah terbunuh, banyak perempuan telah diperkosa, 70% dari seluruh bangunan di negeri itu telah dihancurkan, dan lebih daripada separuh penduduknya telah dipaksa lari meninggalkan rumah mereka.

Laporan ini memberikan pengkajian yang terperinci mengenai kekerasan tersebut, dan analisis tentang sebab, pola, dan variasi-variasi utamanya. Dengan mempelajari dokumen-dokumen dan kesaksian-kesaksian yang belum diterbitkan sebelumnya, laporan ini juga memberikan suatu pengkajian baru mengenai tanggung jawab politik dan hukum atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, dan memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk memastikan bahwa orang-orang yang menjadi penanggungjawabnya diadili.

Kekerasan 1999 memicu kemarahan tidak hanya di Timor-Leste tetapi juga di seluruh dunia. Para pemimpin negara dan badan-badan PBB, termasuk Dewan Keamanan, berjanji bahwa para pelaku akan dihukum. Dua penyelidikan yang dibuat atas perintah PBB, keduanya dilaksanakan pada akhir 1999, menyimpulkan bahwa kejahatan terhadap umat manusia telah dilakukan, dan bahwa pihak-pihak berwenang Indonesia memikul tanggung jawab utama. Satu laporan yang disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia menarik kesimpulan yang serupa, dan ketiga penyelidikan itu merekomendasikan bahwa suatu pengadilan pidana internasional harus dibentuk untuk menjamin bahwa para pelaku diadili sesuai dengan hukum internasional. Sekretaris Jenderal PBB menyambut temuan-temuan itu dan mengatakan bahwa ia akan mengikuti dengan dekat usaha-usaha untuk memberikan keadilan kepada para korban.

Dalam suatu usaha untuk melunakkan tekanan ke arah pembentukan pengadilan internasional, pada 2001 Indonesia membentuk mekanisme peradilan istimewa untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab. Proses itu sekarang telah luas dianggap sebagai sandiwara dan tipuan bagi keadilan, bahkan oleh sekutu-sekutu Indonesia yang paling setia sekalipun. Dari 18 orang yang didakwa dan diadili Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta, hanya seorang yang dijatuhi hukuman, dan satu orang terdakwa ini, yang adalah pemimpin milisi terkenal Eurico Guterres, tetap bebas ketika sedang menunggu keputusan pengadilan tingkat banding. Tidak satupun perwira atau pejabat sipil Indonesia yang dihukum penjara oleh pengadilan tersebut; bahkan sebagian besar dari terdakwa mendapatkan promosi, dan sebagian sekarang menduduki jabatan-jabatan yang penting di dalam jajaran aparat keamanan negeri tersebut.

Peradilan Timor-Leste, dengan bantuan PBB dan dunia internasional, telah bekerja dengan lebih baik. Pada akhir 2004, lebih daripada 370 orang telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada 1999, termasuk Jenderal Wiranto dan sejumlah perwira dan pejabat tinggi Indonesia. Dari jumlah itu, sekitar 50 orang telah diadili dan dijatuhi hukuman penjara oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat Timor-Leste. Sayangnya, hampir semua yang telah diadili adalah milisi lokal atau orang Timor-Leste tentara Indonesia yang berpangkat rendah. Para perwira dan pejabat Indonesia secara efektif tetap berada di luar jangkauan pengadilan Timor-Leste. Misalnya, pada akhir 2004, sekitar 280 dari 370 terdakwa berada di Indonesia dengan bebas.

Sebagian penyebab langkanya kemajuan yang mengecewakan itu adalah kelemahan peradilan di Indonesia, dan penolakan oleh pihak berwenang Indonesia untuk bekerjasama dengan proses di Timor-Leste. Ini juga terkait dengan keengganan pemimpin politik Timor-Leste untuk bertentangan dengan Indonesia yang merupakan tetangga yang begitu besar dan berpotensi membahayakan. Keprihatinan ini telah membuat Presiden Timor-Leste, Xanana Gusmão, dan sejumlah menteri pemerintah menyatakan secara terbuka penolakan terhadap gagasan mengenai pengadilan internasional, dan sebaliknya berfokus pada rekonsiliasi.

Tetapi, persoalan yang sebenarnya adalah kegagalan menyeluruh negara-negara penting dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri untuk mengambil dan menerima pertanggungjawaban dalam hal ini. Selain pernyataan-pernyataan kemarahan awal, dan sejumlah dukungan yang berarti pada proses peradilan di Timor-Leste, tidak ada usaha internasional yang serius untuk menjamin bahwa orang-orang yang paling bertanggung jawab untuk kekejaman-kekejaman 1999 akan dihadapkan ke pengadilan. Gagasan tentang pengadilan pidana internasional untuk Timor-Leste, yang secara resmi didukung oleh ketiga penyelidikan yang sungguh-sungguh itu, secara efektif telah ditinggalkan. Sebagai penggantinya, pihak-pihak yang berkepentingan telah mengusulkan berbagai tindakan yang tidak cukup kuat, meliputi pembentukan satu Komisi Pakar PBB, yang menilai pengadilan di Indonesia dan Timor-Leste, dan satu Komisi Kebenaran dan Persahabatan gabungan Indonesia-Timor-Leste, dengan mandat untuk membahas apa yang terjadi pada 1999, tetapi

tidak untuk melakukan apapun mengenainya. Sementara hal yang baik mungkin akhirnya dihasilkan oleh inisiatif-inisiatif itu, ada satu bahaya nyata bahwa inisiatif-inisiatif itu hanya akan menunda, dan mungkin bahkan menggagalkan sama-sekali, proses peradilan yang benar.

Laporan ini menawarkan rekomendasi yang lebih langsung: agar Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan membentuk, tanpa menunda lagi, suatu pengadilan pidana internasional untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor-Leste pada 1999. Karena beratnya kejahatan-kejahatan tersebut, fakta bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan lebih daripada lima tahun yang lalu, dan bahwa semua penyelesaian telah diupayakan dan ternyata tidak mencukupi, hal ini bukanlah usulan yang tidak beralasan. Sesungguhnya, melakukan yang kurang daripada itu akan merupakan pernyataan penghinaan terhadap penegakan hukum, dan mengirimkan pesan yang jelas kepada para pelaku kejahatan di masa lalu dan masa mendatang—baik di Indonesia, Sudan, Irak, Amerika Serikat, atau di mana saja—bahwa mereka tidak perlu takut akan adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Gagasan untuk laporan ini berasal dari dalam Unit Hak Asasi Manusia Misi Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (United Nations Mission of Support in East Timor - UNMISSET), dan saya ditugaskan menulisnya pada pertengahan 2002 oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (Office of the High Commissioner for Human Rights - OHCHR). Gagasannya adalah mengkaji sangat banyak bukti yang telah dikumpulkan oleh Pejabat Urusan Politik dan Pejabat Urusan Hak Asasi Manusia PBB sejak 1999, dengan tujuan menulis suatu pengkajian yang lebih mendalam daripada yang dimungkinkan pada saat kekerasan itu baru terjadi. Antara lain, dibayangkan bahwa laporan ini akan disampaikan kepada Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor-Leste yang waktu itu baru memulai pekerjaannya yang penting, dan kepada badan-badan resmi lainnya yang diberi wewenang menyelidiki dan mengadili kejahatan-kejahatan 1999. Juga ada kesepakatan umum bahwa laporan ini akan diterbitkan dan disebarluaskan secara luas, jika mungkin dalam bahasa Indonesia dan Tetum, selain dalam bahasa Inggris.

Seperti yang dibayangkan, informasi yang dikumpulkan oleh para Pejabat Urusan Politik dan Pejabat Urusan Hak Asasi Manusia PBB di Timor-Leste amat kaya dan mengerikan. Tetapi segera jelas bahwa lembaga-lembaga lain di Timor-Leste juga memiliki informasi tambahan yang merupakan pelengkap yang berguna bagi bukti yang dikumpulkan oleh Unit Hak Asasi Manusia, termasuk satu kumpulan besar dokumen yang telah dikumpulkan dari puing-puing kantor-kantor militer, kepolisian, dan milisi pada akhir 1999. Koleksi yang paling penting adalah yang dimiliki organisasi hak asasi manusia lokal, Yayasan HAK, dan Unit Kejahatan Berat (Serious Crimes Unit - SCU), suatu badan yang dibentuk pada akhir 2000 oleh Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (United Nations Transitional Authority in East Timor - UNTAET).

Meskipun ada kekhawatiran awal mengenai konfidensialitas, Yayasan HAK dan SCU akhirnya memberikan akses kepada koleksi arsip mereka untuk tujuan pembuatan laporan ini. Keduanya juga memberikan bantuan yang sangat bernilai dengan pengecekan fakta dan penafsiran hukum, ketika laporan ini sedang ditulis. Pribadi-pribadi dan organisasi-organisasi lain—terutama staf pada International Center for Transitional Justice di New York dan pada kantor pusat Amnesty International di London—memberikan komentar-komentar dan nasihat yang bernilai pada berbagai rancangan laporan. Tanpa bantuan orang-orang dan organisasi-organisasi ini, tanpa komitmen murni mereka pada keadilan, laporan ini akan sangat sulit ditulis.

Laporan ini selesai ditulis pada Juli 2003, dan pada awal 2004 Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia secara resmi menyampaikan satu salinan kepada CAVR. Salinan juga disampaikan kepada Yayasan HAK dan Unit Kejahatan Berat, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan untuk menghargai bantuan mereka. Versi yang diterbitkan oleh Yayasan HAK ini telah mengalami sedikit penyuntingan, tetapi substansi serta argumen-argumen dan kesimpulan-kesimpulan utamanya tetap tidak berubah dari aslinya.

Lima tahun telah berlalu sejak kejahatan-kejahatan yang diuraikan dalam laporan ini dilakukan, dan sejak masyarakat internasional berjanji bahwa kejahatan-kejahatan tersebut akan dihukum. Sebagai salah seorang yang menyaksikan kejadian-kejadian mengerikan pada 1999, dan yang memercayai kejujuran janji keadilan itu, saya sedih bahwa hanya sedikit yang telah dilakukan untuk membuatnya menjadi kenyataan. Saya berharap bahwa penerbitan laporan ini akan mendorong maju penyelesaian keadaan tersebut.

Geoffrey Robinson

Los Angeles, November 2004

Ringkasan Eksekutif

*Masa lalu tak dapat dibiarkan terselimuti misteri. Dalam keadaan seperti itu, korban akan terus mencari keadilan dan tidak akan dapat mengatasi duka cita dan kesedihan mereka.**

Selama 1999, Timor-Leste merupakan tempat terjadinya kekerasan yang mengerikan. Antara awal Januari dan akhir Oktober, sekurangnya 1.200 sampai 1.500 orang dibunuh. Sebagian ditembak mati, sementara yang lain dipenggal kepalanya, dikeluarkan isi tubuhnya, atau dipotong dengan parang sampai mati. Banyak dari mereka mengalami siksaan dan penganiayaan. Kaum perempuan dewasa dan perempuan muda usia mengalami pemerkosaan dan kejahatan kekerasan seksual lainnya. Kekerasan sistematis ini memicu pemindahan penduduk secara paksa dalam skala yang masif.

Kekerasan itu terjadi dalam konteks pelaksanaan referendum atau Jajak Pendapat mengenai status politik Timor-Leste, yang diawasi dan dijalankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 Agustus 1999. Sebelum berlangsungnya pemungutan suara, orang yang diduga mendukung kemerdekaan terus-menerus mendapat ancaman dan tindak kekerasan dari kelompok milisi pro-Indonesia. Terlepas dari bahaya yang nyata mengancam mereka, rakyat Timor-Leste menyambut kesempatan menentukan masa depan politik mereka dan secara meyakinkan memilih merdeka.

Kekerasan terus meningkat menyusul pengumuman hasil pemungutan suara pada 4 September. Selama beberapa minggu setelah pengumuman itu, tentara dan polisi Indonesia bergabung dengan pasukan milisi pro-Indonesia yang bersenjata melancarkan tindak kekerasan yang begitu hebat dan kejam, sampai-sampai membuat mereka yang telah menduga akan terjadi kekerasan pun terkejut. Sebelum pasukan yang disahkan PBB tiba untuk menertibkan keadaan pada akhir September, ratusan orang dibunuh dan sekitar 400.000—lebih daripada separuh penduduk Timor-Leste—dipaksa lari meninggalkan rumah mereka.

Pihak berwenang Indonesia memberikan beragam penjelasan mengenai kejadian-kejadian itu. Mereka mengklaim bahwa kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia dibentuk secara spontan karena adanya provokasi dari aktivis pro-kemerdekaan, dan bahwa kekerasan adalah hasil “bentrokan” antara kedua belah pihak. Kekerasan setelah pemungutan suara, menurut pandangan resmi ini, adalah wajar karena merupakan ungkapan kemarahan orang Timor-Leste yang pro-Indonesia, terhadap sikap PBB yang cenderung berpihak pada kemerdekaan. Menanggapi bukti-bukti bahwa tentara Indonesia sendiri telah melakukan tindak kekerasan, pihak berwenang Indonesia mengakui adanya “oknum-oknum” yang mungkin

* United Nations, *Situation of Human Rights in East Timor* (UN No. A/54/660), 10 Desember 1999, paragraf 65.

telah berbuat demikian, tetapi sekaligus menekankan bahwa angkatan bersenjata sebagai sebuah institusi tetap teguh pada disiplin dan bekerja keras mencegah terjadinya kekerasan.

Para pengamat dari luar, seperti juga banyak orang Timor-Leste sendiri, memberikan penafsiran yang berbeda. Mereka menggugat klaim bahwa kekerasan adalah hasil “bentrokan” antar-orang Timor-Leste sendiri, dan sebaliknya mengatakan bahwa kekerasan itu dipicu oleh pihak berwenang militer Indonesia, khususnya Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Mereka menyatakan bahwa kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia sebenarnya hanya merupakan pasukan perpanjangan tangan, yang diciptakan, diperlengkapi, dan diorganisasi oleh pihak berwenang militer dan sipil Indonesia, dan bahwa kelompok-kelompok milisi bertindak di bawah perintah perwira-perwira militer Indonesia. Menanggapi klaim bahwa keterlibatan militer terbatas pada “oknum-oknum” saja, para pengamat dan orang Timor-Leste menunjuk pada bukti-bukti tentang keterlibatan sejumlah perwira tinggi, dan bukti-bukti bahwa banyak dari kekerasan itu direncanakan sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan pandangan yang berbeda-beda tersebut, laporan ini berusaha memberikan pengkajian independen mengenai sifat dan penyebab kekerasan di Timor-Leste. Lebih khususnya, laporan ini punya tiga tujuan. Pertama, laporan ini berusaha menguraikan dan menentukan sifat kekerasan tersebut selengkap dan seakurat mungkin, dengan fokus pada periode antara 1 Januari dan akhir Oktober 1999. Kedua, laporan ini berusaha menjelaskan bagaimana dan mengapa kekerasan itu terjadi. Ketiga, dan yang paling penting, laporan ini berusaha menetapkan para pelaku yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut, dan tindakan-tindakan penyelesaian yang tepat terhadap mereka.

Metode dan mandat

Temuan dan kesimpulan laporan ini bukan didasarkan pada klaim-klaim tanpa bukti yang dibuat oleh pejabat pemerintah Indonesia maupun para pengkritiknya. Laporan ini juga tidak bertolak dari penemuan “satu bukti yang mengenai segalanya”, baik dalam bentuk dokumen maupun kesaksian. Laporan ini didasarkan pada pemeriksaan dan analisis yang teliti terhadap sumber dokumenter maupun kesaksian yang berbobot dan sekarang banyak jumlahnya. Sumber-sumber utama laporan ini mencakup:

- Laporan internal, memoranda, dan surat perintah yang semua bersifat rahasia yang berasal dari pihak berwenang militer, kepolisian, dan sipil Indonesia, dan berbagai kelompok milisi dan organisasi pro-Indonesia lainnya;
- Kesaksian dari para saksi mata dan korban kekerasan, yang diambil dan dikumpulkan oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional dan domestik, para ahli hukum, dan oleh para pejabat PBB;
- Laporan dan memoranda internal mengenai kejadian-kejadian selama 1999 yang disusun oleh Misi PBB di Timor-Leste (UNAMET – UN Mission

in East Timor), Pemerintah Transisi PBB di Timor-Leste (UNTAET – UN Transitional Administration for East Timor), dan Misi Dukungan PBB untuk Timor-Leste (UNMISSET – UN Mission of Support in East Timor);

- Temuan dari berbagai penyelidikan tepercaya lain mengenai kekerasan tersebut, termasuk yang dikeluarkan oleh tiga orang Pelapor Khusus PBB (Desember 1999), Komisi Penyelidikan Internasional mengenai Timor-Leste (Januari 2000), dan oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk Timor-Leste yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Januari 2000);
- Surat-surat dakwaan pidana yang dibuat terhadap para pelaku kekerasan oleh kejaksaan di Indonesia dan Timor-Leste, dan informasi yang muncul dalam persidangan pidana di kedua negara;
- Analisis ilmiah, laporan media, dan sumber-sumber sekunder lainnya.

Laporan ini dibuat berdasarkan permintaan dari Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada Juli 2002. Penelitian dan penulisannya dilakukan oleh Dr. Geoffrey Robinson, Guru Besar Madya bidang Sejarah pada University of California, Los Angeles (UCLA). Pakar masalah hak asasi manusia di Indonesia dan Timor-Leste ini bertugas sebagai Pejabat Urusan Politik dalam Misi PBB di Timor-Leste (UNAMET) di Dili dari Juni sampai November 1999. Ia melakukan penelitian untuk laporan ini di Dili antara Agustus sampai Oktober 2002, dan menyelesaikannya pada Juli 2003. Dalam menyiapkan laporan ini, ia dibantu oleh Unit Hak Asasi Manusia dari Misi Dukungan PBB di Timor-Leste (UNMISSET) dan oleh Unit Kejahatan Berat (SCU – Serious Crimes Unit) dari Kantor Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat di Dili.

Kerangka dan kesimpulan

Laporan ini dibagi menjadi lima bagian, setiap bagian terdiri atas dua bab atau lebih. Bagian pertama (Bab 1 dan 2) menempatkan rangkaian kejadian 1999 dalam konteks sejarah dan politik, dan secara garis besar menguraikan unsur-unsur pokok strategi Indonesia di Timor-Leste pada 1999. Bagian kedua (Bab 3 sampai dengan 5) mengkaji dan menganalisis pola-pola umum pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste pada 1999. Bagian ketiga (Bab 6 sampai dengan 8) menguraikan hakikat hubungan antara kelompok-kelompok milisi bersenjata dengan pihak-pihak berwenang Indonesia. Bagian keempat (Bab 9 dan 10) memberikan ringkasan keadaan hak asasi manusia di setiap distrik administratif di Timor-Leste yang berjumlah 13, dan pengkajian yang terperinci terhadap 15 kasus hak asasi manusia yang utama. Bagian terakhir (Bab 11 dan 12) mengkaji persoalan pertanggungjawaban dan penyelesaian hukum bagi kejahatan yang dilakukan pada 1999.

Laporan ini menyimpulkan bahwa tindak kekerasan pada 1999 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, bahwa kekerasan tersebut adalah bagian dari operasi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak berwenang Indonesia, dan bahwa

pejabat-pejabat tinggi Indonesia mengemban tanggung jawab pidana individual dan tanggung jawab komando atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Lebih khususnya, laporan ini menyimpulkan bahwa:

1. Tindak kekerasan yang diuraikan dalam laporan ini—mencakup pembunuhan, pemerkosaan, penyisaan, pemindahan paksa, dan penghancuran harta-benda—adalah bagian dari serangan meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Timor-Leste, yang menjadikan mereka yang benar-benar mendukung atau diduga mendukung kemerdekaan sebagai sasaran. Karena itu, tindak kekerasan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, namun juga merupakan kejahatan terhadap umat manusia.
2. Para pelaku langsung kejahatan tersebut terutama adalah para anggota kelompok milisi pro-Indonesia, yang jumlahnya lebih daripada dua lusin pada 1999. Meskipun demikian, anggota-anggota TNI, dan dalam jumlah kecil Polri, juga sangat sering merupakan penanggung jawab langsung.
3. Berlawanan dengan klaim para pejabat Indonesia, kelompok-kelompok milisi tidak muncul secara spontan menjawab provokasi dari kelompok-kelompok pro-kemerdekaan. Mereka direkrut, dilatih, dipersenjatai, dibiayai, dan dikoordinasikan oleh pihak berwenang militer Indonesia, sejalan dengan doktrin dan praktik militer Indonesia yang sudah lama berlaku.
4. Para perwira TNI dan pejabat pemerintah sipil bersekongkol untuk menggunakan milisi sebagai perpanjangan tangan mereka guna melancarkan teror terhadap penduduk agar mendukung pilihan 'otonomi khusus' dalam pemungutan suara Agustus 1999, dan untuk mencapai tujuan tersebut, mereka mengesahkan, mendorong, atau membiarkan terjadinya tindak kekerasan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
5. Sekitar 50 perwira berpangkat letnan kolonel atau lebih tinggi, dan sekitar 30 pejabat tinggi pemerintah dan kepolisian, diduga mengemban tanggung jawab komando atau tanggung jawab individual atas kejahatan yang terjadi, dan semestinya dijadikan sasaran penyelidikan pidana lanjutan.
6. Terlepas dari sumbangannya dalam mengakhiri kekerasan September 1999, negara-negara besar anggota masyarakat internasional ikut mengemban tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan pada 1999, karena dalam sejarahnya membiarkan Indonesia melakukan pendudukan yang melanggar hukum terhadap Timor-Leste, dan karena tidak mendesakkan pengaturan keamanan yang memadai untuk Jajak Pendapat pada 1999.
7. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa para pelaku kekerasan di Timor-Leste diajukan ke pengadilan. Dewan Keamanan semestinya menjalankan rekomendasi-rekomendasi dari penyelidikan-penyelidikan PBB sebelumnya, dan membentuk pengadilan pidana internasional bagi Timor-Leste pada kesempatan yang paling awal.

Konteks sejarah dan politik

Inti dari krisis 1999 sesungguhnya adalah masalah status politik Timor-Leste. Setelah lama menjadi jajahan Portugal, Timor-Leste diserbu dan akhirnya dicaplok oleh negara tetangganya, Indonesia, pada 1975. Selama 24 tahun status politik wilayah itu menjadi sengketa, baik di Timor-Leste sendiri maupun secara internasional. Walaupun sejumlah negara mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut, PBB tidak pernah mengakuinya. Bagi PBB, Portugal tetap menyangang status formal sebagai penguasa administratif wilayah tersebut.

Periode kekuasaan Indonesia (1975-1999) ditandai oleh perlawanan terus-menerus, baik yang menggunakan senjata maupun cara-cara damai. Pada tahun-tahun pertama, perlawanan itu dipimpin oleh Fretilin (*Frente Revolucionária de Timor Leste Independente* – Front Revolusioner untuk Timor Leste Merdeka); dan sayap bersenjataanya, Falintil (*Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor Leste* – Angkatan Bersenjata untuk Pembebasan Nasional Timor-Leste). Pada dasawarsa 1990-an sebuah organisasi payung yang bernama CNRT (*Conselho Nacional de Resistência Timorese* – Dewan Nasional Perlawanan Bangsa Timor) memegang kepemimpinan, didukung oleh sejumlah organisasi sosial dan politik, Front Klandestin, dan Falintil.

Kekuasaan Indonesia di Timor-Leste ditandai oleh pola pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis oleh angkatan bersenjata Indonesia serta milisi dan kelompok paramiliter pro-Indonesia yang menjadi perpanjangan tangannya. Terlepas dari kritik internasional yang terus meningkat terhadap pelanggaran yang dilakukan Indonesia, dan adanya perlawanan yang terus berlanjut, selama bertahun-tahun hampir tidak ada tindakan konkret yang diambil untuk menyelesaikan masalah status politik Timor-Leste.

Situasi tersebut mulai berubah dengan mundurnya presiden Indonesia yang lama berkuasa, Soeharto, pada Mei 1998. Pada Januari 1999 pemerintah Indonesia mengumumkan kesiapannya untuk meninggalkan Timor-Leste, jika rakyat di wilayah tersebut menolak usulan 'otonomi luas' di bawah kekuasaan Indonesia. Inisiatif itu membuka jalan bagi serangkaian kesepakatan antara Indonesia, Portugal, dan PBB, yang dikenal sebagai Kesepakatan 5 Mei. Kesepakatan itu menetapkan cara-cara pelaksanaan hak memilih dan pemeliharaan keamanan, dan menetapkan bahwa pemilihan akan diorganisasi dan dilaksanakan oleh PBB. United Nations Mission in East Timor (UNAMET – Misi PBB di Timor-Leste) mulai bekerja pada Mei, dan pemungutan suara dilakukan pada 30 Agustus 1999.

Invasi dan pendudukan Indonesia

Selama sekitar tiga abad, wilayah yang dikenal sebagai Timor-Leste merupakan koloni Portugal. Status itu mulai goyah pada 1974, ketika setelah terjadinya Revolusi Anyelir, Portugal bersiap menghapus kekuasaan atas jajahannya, termasuk Timor-Leste. Surutnya Portugis ini mendorong tumbuhnya partai-partai politik di Timor-Leste.

Pada 1975, ada tiga partai utama yang muncul: ASDT (*Associação Social Democrática de Timor* – Perhimpunan Sosial Demokratik Timor) yang kemudian berganti nama menjadi Fretilin; UDT (*União Democrática Timorese* – Serikat Demokratik Timor), dan Apodeti (*Associação Popular Democrática Timorese* – Perhimpunan Kerakyatan Demokratik Timor). Fretilin adalah partai sosial demokratik yang para pemimpinnya menuntut kemerdekaan segera. UDT, sebuah partai yang lebih konservatif, ingin mempertahankan hubungan dengan Portugal sambil menjalani transisi bertahap menuju kemerdekaan. Apodeti, partai yang paling kecil, menginginkan integrasi dengan negara tetangga, Indonesia.

Terlepas dari adanya aliansi antara Fretilin dan UDT yang dibentuk Januari 1975, ketegangan di antara kedua partai itu terus tumbuh dan, menyusul sebuah upaya kup oleh UDT pada Agustus, menajam menjadi konflik bersenjata. Pada titik yang menentukan ini, penguasa Portugis mengabaikan Timor-Leste. Gubernur Portugis dan stafnya melarikan diri ke Pulau Ataúro, dan pemerintah di Lisabon hanya melakukan upaya seperlunya untuk merundingkan proses dekolonisasi yang memuaskan.

Setelah bertempur beberapa minggu, yang berlangsung dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, Fretilin muncul sebagai pemenang dalam perang saudara itu dan mulai berusaha mengonsolidasikan otoritasnya di dalam negeri serta memperoleh dukungan internasional. Akan tetapi, usaha-usaha itu bertabrakan dengan rencana Indonesia, negara tetangganya yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, mantan jenderal Angkatan Darat yang berkuasa melalui suatu kup antikomunis pada 1965, dan yang tetap berkuasa sampai Mei 1998.

Rezim Orde Baru Soeharto memberikan keleluasaan yang tiada taranya bagi perluasan kekuasaan militer di bidang ekonomi dan politik. Lembaga-lembaga dan pemimpin-pemimpin sipil secara bertahap didorong ke pinggir kehidupan politik, dan dilucuti wewenangnya dalam pengambilan keputusan.^{*} Cara Soeharto dan sekutunya naik ke kekuasaan pun turut membentuk dan menjadi dasar sebuah gaya pemerintahan baru yang secara mendalam memengaruhi kehidupan politik Indonesia selama 30 tahun selanjutnya, dan yang melahirkan suatu pola pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di Indonesia dan, setelah 1975, di Timor-Leste.

Gaya baru ini mencakup suatu ideologi negara yang sibuk dengan keamanan dan persatuan nasional, dan tanpa toleransi samasekali pada pembangkangan. Gaya itu juga mengarah pada pelaksanaan suatu doktrin militer mengenai ‘pertahanan rakyat semesta’ yang melibatkan mobilisasi kekuatan milisi untuk melancarkan perang terhadap musuh-musuh negara di dalam negeri.[†] Pada masa setelah kup, militer maupun milisi menggunakan cara-cara brutal, banyak di antaranya

^{*} Mengenai peran politik angkatan bersenjata pada masa awal Orde Baru, lihat Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1978, bab 9-14.

[†] Mengenai sejarah dan implikasi politik dari doktrin ini, lihat Geoffrey Robinson, “Indonesia: On a New Course?” Muthiah Alagappa, penyunting, *The Declining Role of the Military in Asia*, Stanford University Press, 2001. Lihat juga Abdul Haris Nasution, *Fundamentals of Guerrilla Warfare*, Praeger, New York, 1965.

mengikuti tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pembantaian 1965-1966. Di bawah pengarahannya Angkatan Darat—khususnya di bawah Komando Pasukan Khusus (Kopassus)— pasukan-pasukan milisi dan paramiliter dikerahkan untuk melaksanakan berbagai “tugas kotor” dan operasi tertutup, yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, pembunuhan di muka umum, pemenggalan kepala, dan pemerkosaan, sebagai cara-cara pengendalian politik.*

Kecenderungan-kecenderungan ideologis dan pola-pola perilaku seperti inilah yang membentuk tanggapan Orde Baru terhadap perkembangan di Timor-Leste pada 1975. Sementara di permukaan menjalankan perundingan diplomatik dengan Portugal, dan memelihara kesan tidak mau campurtangan dalam urusan dalam negeri Timor-Leste, Indonesia menggerakkan operasi rahasia untuk memastikan pencaplokan wilayah itu.

Kegiatan tertutup yang dilancarkan pada 1975 ini mencakup penyusupan kesatuan-kesatuan tempur dan pasukan-pasukan paramiliter melintasi batas dari Timor Barat ke Timor-Leste, di mana mereka digambarkan sebagai ‘sukarelawan’ anti-Fretilin yang menginginkan integrasi dengan Indonesia. Operasi militer tertutup ini mulai terungkap ke khalayak luas pada Oktober 1975, ketika lima orang wartawan Barat yang meliput perkembangan di sana, dibunuh oleh pasukan Indonesia di kota Balibó, di dalam wilayah Timor-Leste. Dokumen-dokumen rahasia pemerintah yang baru-baru ini dibuka mengungkap bahwa sejumlah pemerintah di masa lalu memilih tidak menekan pejabat Indonesia dengan masalah tersebut.

Di bawah tekanan terus-menerus akibat serangan lintas-batas, pengabaian oleh Portugal dan sebagian besar masyarakat internasional, dan ancaman serangan besar-besaran oleh Indonesia, pada 28 November 1975 Fretilin mengumumkan kemerdekaan Timor-Leste. Proklamasi Republik Demokratik Timor Leste merdeka ini menjadi dalih terakhir bagi invasi Indonesia. Dengan klaim bahwa Indonesia menghadapi ancaman kebangkitan komunis dan ketidakstabilan politik di perbatasan, pada 7 Desember 1975 Indonesia melancarkan serangan melalui darat, laut, dan udara terhadap negara baru merdeka itu.

Para pemimpin militer Indonesia menduga bahwa operasi untuk menduduki Timor-Leste hanya akan memakan waktu beberapa hari saja, dan bahwa penduduk tidak akan memberikan perlawanan berarti sebelum akhirnya takluk pada kontrol Indonesia. Namun, kenyataannya berbeda. Operasi Indonesia itu tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, dan rakyat Timor-Leste melawan pasukan penyerang itu dengan ketahanan sangat besar.

Sebagai langkah yang jelas ditujukan untuk membungkam kritik internasional, pihak berwenang Indonesia membentuk Majelis Rakyat Timor Timur yang, dalam satu-

.....
* Asal-usul dan perkembangan dari doktrin dan praktik militer Orde Baru telah dianalisis secara lengkap. Lihat Richard Tanter, “The Totalitarian Ambition: Intelligence Organisations and the Indonesian State,” dan Michael van Langenberg “The New Order State: Language, Ideology, Hegemony,” keduanya dalam Arief Budiman, penyunting, *State and Civil Society in Indonesia*, Clayton, Vic: Monash Papers on Southeast Asia, No. 22, 1990.

satunya sidang pada 31 Mei 1976, secara resmi meminta integrasi menjadi provinsi Indonesia. Pihak berwenang Indonesia memenuhi permintaan tersebut pada 17 Juli 1976, dengan menetapkan Undang-Undang No. 7/1976 yang memutuskan integrasi Timor-Leste sebagai provinsi Indonesia yang ke-27.

Sementara itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menghadapi perlawanan yang terus berlanjut dengan meningkatkan operasi-operasi militernya. Operasi yang luarbiasa keras dan kejam dilancarkan pada 1975-1983. Dengan menggunakan pesawat tempur OV-Bronco yang disediakan oleh Amerika Serikat, tentara Indonesia melakukan pengeboman udara besar-besaran terhadap kawasan perdesaan. Penduduk yang dianggap mendukung perlawanan dipindahkan secara paksa ke suatu versi Indonesia dari 'desa-desa strategis' yang digunakan tentara Amerika Serikat di Vietnam.

Pengeboman dan pemindahan paksa ini mengakibatkan kelaparan dan penyakit yang meluas. Pada 1980 organisasi-organisasi gereja dan hak asasi manusia memperkirakan bahwa sebanyak 200.000 penduduk dari sekitar 700.000 penduduk sebelum invasi, meninggal dunia. Kebanyakan meninggal akibat kelaparan dan penyakit, tetapi sejumlah besar orang dibunuh dalam pertempuran atau eksekusi sewenang-wenang. Walaupun skala pembunuhan dan krisis kemanusiaan agak menurun dalam dua dasawarsa selanjutnya, pasukan tentara Indonesia dan kelompok-kelompok milisi setempat yang mereka kerahkan terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis sampai kepergian akhir mereka dari wilayah itu pada Oktober 1999.

Resistansi

Tentara Indonesia menghadapi perlawanan hebat, baik yang menggunakan senjata maupun cara-cara damai, selama 24 tahun pendudukan mereka di Timor-Leste. Gerakan perlawanan mendapat dukungan dari Gereja Katolik dan lapisan besar generasi muda yang merancang strategi-strategi baru untuk menghubungkan perjuangan mereka dengan jaringan-jaringan dan organisasi-organisasi internasional.

Dalam hampir seluruh masa pendudukan, Fretilin dan sayap bersenjataanya, Falintil, menjadi ujung tombak gerakan perlawanan. Pada awal dasawarsa 1980-an, Falintil berkembang menjadi pasukan gerilya bergerak, yang unit-unitnya beroperasi dengan sangat otonom. Mereka juga mendapat dukungan dari setidaknya sebagian penduduk yang memberi mereka makanan, tempat berlindung, dan informasi. Pendekatan itu mendatangkan bahaya bagi penduduk sipil, yang menjadi sasaran operasi militer Indonesia. Tetapi di sisi lain, strategi itu memungkinkan satu kelompok gerilya dengan sekitar 1.000 pejuang bersenjata untuk menghadapi dan kadang bahkan menimbulkan korban di pihak tentara Indonesia yang memiliki persenjataan lengkap dan jumlahnya dua puluh kali lipat lebih besar.

Betapapun pentingnya peran para pejuang bersenjata itu, perlawanan terhadap pendudukan Indonesia tidak hanya, atau tidak terutama, dilakukan dengan kekuatan senjata. Hal ini terutama berlangsung setelah 1981, ketika kepemimpinan perlawanan, dan Falintil, dilanjutkan oleh José Alexandre Gusmão, yang lebih dikenal dengan nama Xanana Gusmão. Di bawah kepemimpinannya, perlawanan bersenjata semakin dilengkapi dengan suatu jaringan dari kelompok-kelompok yang beroperasi terutama di medan politik, baik di Timor-Leste maupun di luar negeri. Organisasi-organisasi yang memiliki bentuk resmi ini antara lain adalah Renetil (*Resistência Nacional dos Estudantes de Timor Leste* – Resistansi Nasional Pelajar Timor Leste), OJETIL (*Organização de Juventude e Estudante de Timor Leste* – Organisasi Pemuda dan Pelajar Timor Leste), dan kelompok perempuan OMT (*Organização das Mulheres Timorenses* – Organisasi Perempuan Timor). Selain itu masih ada lusinan kelompok setengah resmi atau tidak resmi yang tersebar di seluruh negeri dan di kota-kota utama di Indonesia.

Jaringan yang biasanya disebut Front Klandestin ini memelihara hubungan dengan gerakan perlawanan bersenjata, tetapi tidak berperan langsung dalam konflik bersenjata. Banyak dari yang aktif dalam Front Klandestin ini adalah orang-orang muda dan pelajar/mahasiswa yang dibesarkan dan dididik di bawah kekuasaan Indonesia. Di samping bekerja di dalam Timor-Leste, unsur-unsur dari jaringan ini juga mengumpulkan informasi mengenai perkembangan politik dan hak asasi manusia, dan menyebarkannya kepada organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional, media, dan pemerintahan asing. Salah satu kelompok terpenting yang terlibat dalam kegiatan seperti ini adalah organisasi hak asasi manusia, Yayasan HAK.

Mereka yang mengkritik dan menentang kekuasaan Indonesia juga mendapat dukungan dari dalam Gereja Katolik Timor-Leste, sekutu yang kuat di kalangan penduduk yang hampir seluruhnya beragama Katolik.^{*} Para pemimpin agama memberi perlindungan kepada korban-korban operasi militer dan angkat bicara melawan pendudukan. Sikap ini dipelopori oleh Monsignor Martinho da Costa Lopes, seorang pengkritik keras kekuasaan Indonesia yang digeser dari kedudukannya sebagai Administrator Apostolik pada 1983. Penggantinya, Monsignor Carlos Filipe Ximenes Belo, semula dikira lebih menurut. Namun pada 1989, Monsignor Belo mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB waktu itu, Javier Perez de Cuellar, mengecam kekerasan yang dilakukan Indonesia dan meminta PBB menyelenggarakan referendum mengenai masa depan politik Timor-Leste.[†]

Pada akhir dasawarsa 1980-an, perlawanan mengalami transformasi lebih lanjut. Meninggalkan retorika kiri dari tahun-tahun sebelumnya, Xanana Gusmão meminta partai-partai Timor Leste bergabung dalam front persatuan perlawanan nasional

^{*} Untuk uraian tentang peran Gereja Katolik lihat Arnold Kohen, *From the Place of the Dead: The Epic Struggles of Bishop Belo of East Timor*, New York: St Martin's Press, 1999.

[†] Teks surat tersebut dikutip dalam Kohen, *From the Place of the Dead*, halaman 137.

yang bernama CNRM (*Conselho Nacional de Resistência Maubere* – Dewan Nasional Perlawanan Maubere). Dalam sebuah pertemuan besar di Portugal, pada April 1998, CNRM diubah menjadi CNRT (*Conselho Nacional de Resistência Timorese* – Dewan Nasional Resistansi Bangsa Timor), dengan Xanana Gusmão sebagai Ketua. Falintil yang awalnya merupakan sayap bersenjata Fretilin, dinyatakan sebagai angkatan bersenjata seluruh perlawanan nasional.

Mundurnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 membuat tujuan memperkuat sebuah front nasional semakin mendesak, dan juga membuka kesempatan yang tiada bandingannya untuk berorganisasi dan menghimpun kekuatan di Timor-Leste sendiri. Pada September 1998, CNRT secara terbuka mengumumkan keberadaannya di Timor-Leste, dan mendirikan kantor-kantor di seluruh negeri. Para pengurus CNRT segera menjadi sasaran serangan politik dan fisik oleh kelompok-kelompok pro-Indonesia, sehingga banyak dari mereka akhirnya terpaksa menutup kantor mereka dan melarikan diri. Sebagian pendapat mengatakan bahwa mobilisasi kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia yang menjadi pelaku utama kekerasan 1999 ini dimulai pada masa ini sebagai reaksi terhadap inisiatif CNRT.

Bagaimanapun, pada awal 1999 CNRT telah muncul sebagai wakil politik terpenting dari kelompok prokemerdakaan, baik di Timor-Leste maupun dalam urusannya dengan PBB dan pemerintah-pemerintah asing. Sekalipun ada penolakan dari kelompok-kelompok tertentu, bendera CNRT diakui umum sebagai simbol pilihan kemerdekaan, dan menjadi simbol pilihan ‘menolak otonomi’ dalam Konsultasi Rakyat 1999.

Tanggapan internasional

Klaim Indonesia atas Timor-Leste tidak pernah diakui oleh PBB. Antara 1975 dan 1981, Dewan Keamanan dan Sidang Umum PBB mengeluarkan serangkaian resolusi yang mengecam invasi Indonesia dan mengakui hak tak terpisahkan rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri.^{*} Sejalan dengan resolusi-resolusi itu, PBB tetap mengakui Portugal sebagai penguasa administratif resmi di wilayah itu.

Timor-Leste tetap berada dalam agenda Sidang Umum sampai 1982, ketika dengan Resolusi 37/30 (1982) Sekretaris Jenderal PBB diberi mandat untuk bekerjasama dengan Indonesia dan Portugal guna mencari penyelesaian yang dapat diterima secara internasional. Pembicaraan-pembicaraan dilakukan secara berkala di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB selama dasawarsa 1980-an. Selama periode itu, Timor-Leste tetap berada dalam agenda Komite Dekolonisasi PBB, yang bersidang sekali setahun di New York untuk membahas status sejumlah kecil “wilayah tak berpemerintahan sendiri” (*non-self governing territories*) yang masih tersisa.

^{*} Resolusi Dewan Keamanan yang relevan adalah Resolusi No. 384 (1975) 22 Desember 1975 dan No. 389 (1976) 22 April 1976. Kedua resolusi itu meminta Indonesia menarik semua pasukan tentaranya dari Timor-Leste tanpa penundaan. Sesudahnya sampai 1981, Sidang Umum PBB setiap tahun mengeluarkan resolusi yang menegaskan kembali hak dasar rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri, dan mengungkapkan keprihatinan pada penderitaan penduduk.

Tetapi, sangat sedikit yang dilakukan untuk menghentikan invasi Indonesia. Banyak pemerintah asing justru dengan efektif mendukung posisi Indonesia. Invasi Desember 1975, misalnya, dilancarkan sehari setelah satu pertemuan di ibukota Indonesia, Jakarta, antara Presiden Soeharto dengan Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Kissinger dari Amerika Serikat. Transkripsi pertemuan 6 Desember 1975 tersebut, yang akhirnya dibuka dalam keadaan tanpa disensor pada 2001, mengungkapkan bahwa Amerika Serikat secara sengaja membiarkan terjadinya invasi Indonesia.*

Presiden Ford menjamin Presiden Soeharto bahwa Amerika Serikat akan “memahami” jika Indonesia menganggap “perlu mengambil tindakan yang cepat atau drastis” di Timor-Leste. Kissinger mengatakan kepada Soeharto: “Apapun yang Anda lakukan, kami akan berusaha menanganinya sebaik mungkin.” Kedua pejabat itu hanya meminta agar serangan Indonesia itu ditunda sampai mereka kembali ke Washington, agar, dalam kata-kata Kissinger, mereka dapat “memengaruhi reaksi” dan mengurangi “kesempatan orang-orang berbicara dengan cara yang tidak resmi.”

Sikap mendukung pemerintah AS dan sekutunya menjadi semakin jelas sesudah invasi. Menurut perkiraan Departemen Luar Negeri AS sendiri, sekitar 90% peralatan militer yang digunakan dalam invasi Indonesia disediakan oleh Amerika Serikat. Dan dalam tahun-tahun setelah invasi, pemerintah AS yang silih berganti, menyalurkan ratusan juta dolar bantuan ekonomi maupun militer kepada pemerintah Indonesia, dan melindunginya dari tantangan politik yang sesungguhnya terhadap pendudukan ilegalnya atas Timor-Leste.

Amerika Serikat tidak sendirian dalam mendukung Indonesia. Dokumen resmi yang baru dibuka oleh pemerintah Australia dan Selandia Baru mengungkap pola pembiaran dan pemakluman yang sama.

Australia memilih tidak campurtangan dalam invasi 1975 dan kemudian menjadi negara besar pertama dan satu-satunya yang secara *de jure* mengakui klaim Indonesia atas Timor-Leste. Dokumen pemerintah yang dibuka untuk umum (*declassified documents*) mengungkapkan bahwa Australia sudah tahu sebelumnya tentang rencana Indonesia untuk melancarkan invasi pada 1975 dan juga memiliki data yang terperinci mengenai kekejaman pasukan tentara Indonesia selama 24 tahun pendudukan.† Meskipun demikian, selama itu pula pemerintah Australia yang silih berganti berusaha mengabaikan laporan-laporan pelanggaran berat hak asasi manusia di wilayah itu, dan memberikan pelatihan militer yang besar kepada pasukan Indonesia. Pada 2001, mantan Menteri Luar Negeri Australia (1988-1996), Gareth Evans, mengakui bahwa banyak pelatihan militer yang diberikan Australia

* Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Kawat dari Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri, 6 Desember 1975, tentang “Ford-Suharto Meeting.” Teks lengkap dokumen ini dapat dilihat dalam situs jaringan National Security Archives pada <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB62/>

† Lihat Wendy Way, penyunting, *Australia and the Incorporation of Portuguese Timor, 1974-1976: Documents on Australian Foreign Policy*, Melbourne University Press, 2000.

kepada Indonesia “hanya membantu menghasilkan pelanggar hak asasi manusia yang lebih profesional.”

Kejadian-kejadian di Timor-Leste dan pergeseran konteks internasional secara bertahap mulai memperlemah posisi Indonesia sepanjang dasawarsa 1990-an. Kejadian yang merupakan titik balik adalah pembantaian Santa Cruz pada 12 November 1991, di mana sebanyak 270 orang ditembak atau dipukuli sampai mati oleh tentara Indonesia.[†] Rekaman video yang mengejutkan mengenai pembantaian itu disiarkan ke seluruh dunia, memicu kemarahan dan mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok pendukung Timor-Leste di seluruh dunia.

Penangkapan pemimpin perlawanan, Xanana Gusmão, pada akhir 1992, pengadilan politik terhadapnya setahun kemudian, dan perjuangannya untuk kemerdekaan Timor-Leste dari dalam penjara, terus meningkatkan profil gerakan perlawanan. Perkembangan ini mendorong adanya kegiatan baru dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan menghasilkan pengiriman pejabat-pejabat PBB ke Timor-Leste untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia.[‡]

Perkembangan penting lain adalah saat dua orang Timor-Leste, yaitu juru bicara internasional resistansi José Ramos-Horta dan Uskup Dili, Monsignor Carlos Belo, mendapat Anugerah Nobel pada 1996. Anugerah Nobel ini meningkatkan harapan akan kemerdekaan jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan juga meningkatkan kekuatan kelompok-kelompok pendukung Timor-Leste serta organisasi nonpemerintah lainnya. Prospek penyelesaian masalah Timor-Leste lebih lanjut meningkat pada 1997 dengan pengangkatan Kofi Annan menjadi Sekretaris Jenderal PBB.

Akan tetapi, perubahan terpenting terjadi pada Mei 1998 ketika gelombang pasang protes di Indonesia yang bersamaan dengan krisis ekonomi besar memaksa Presiden Soeharto mundur dari kekuasaannya selama lebih daripada 30 tahun.

.....
* Gareth Evans, “Indonesia: My Mistake,” *International Herald Tribune*, 26 Juli 2001.

† Untuk penjelasan dan analisis mutakhir tentang pembantaian tersebut, lihat Amnesty International, *East Timor: The Santa Cruz Massacre*, November 1991.

‡ Pelapor Khusus PBB mengenai penyiksaan mengunjungi Indonesia dan Timor-Leste pada 1991; Amos Wako mengunjungi wilayah ini sebagai utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB pada 1992 dan 1993; Pelapor Khusus PBB mengenai eksekusi di luar hukum, seketika, atau sewenang-wenang, berkunjung pada 1994; Pelapor Khusus PBB mengenai kekerasan terhadap perempuan, sebab-sebab, dan akibat-akibatnya berkunjung pada akhir 1998; Kelompok Kerja PBB bidang penahanan sewenang-wenang berkunjung pada Februari 1999, dan utusan pribadi Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia berkunjung pada Mei 1999. Pada November 1999 tiga Pelapor Khusus PBB mengadakan satu misi bersama di Timor-Leste. Ketiganya adalah: Pelapor Khusus mengenai eksekusi di luar hukum, seketika, atau sewenang-wenang; Pelapor Khusus mengenai penyiksaan; dan Pelapor Khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan, sebab-sebab, dan akibat-akibatnya.

Terobosan di Indonesia

Pengunduran diri Presiden Soeharto meningkatkan tuntutan luas untuk demokratisasi, dan peran angkatan bersenjata Indonesia dalam kehidupan politik dipertanyakan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih lanjut, krisis ekonomi membuat pemerintah baru sangat memperhatikan negara-negara donor dan lembaga-lembaga pemberi pinjaman seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Karena alasan-alasan itulah, pengganti Soeharto, Presiden B.J. Habibie, beserta sebagian anggota kabinetnya, berusaha keras memperlihatkan komitmen mereka pada demokratisasi, hak asasi manusia, dan kekuasaan sipil. Sebagai bagian dari pendekatan baru tersebut, pada Juni 1998 pemerintahan Habibie mengisyaratkan siap untuk memberikan otonomi luas kepada Timor-Leste, dengan Jakarta tetap memegang kontrol atas urusan luar negeri, pertahanan eksternal, dan kebijakan fiskal.

Perubahan ini memberikan momentum baru kepada perundingan antara Indonesia dan Portugal yang ditengahi oleh PBB, dan pada Oktober 1998 sebuah usulan untuk memberi 'otonomi luas' kepada Timor-Leste di bawah kekuasaan Indonesia disiapkan di bawah pengawasan PBB. Indonesia mengambil posisi bahwa 'otonomi' adalah penyelesaian akhir. Portugal berpandangan bahwa 'otonomi' akan menjadi masa transisi, yang membuka kemungkinan bagi kemerdekaan penuh di masa mendatang. Para pemimpin Timor-Leste—termasuk Xanana Gusmão dan José Ramos-Horta—berpandangan serupa, dan mengusulkan perlunya referendum mengenai kemerdekaan setelah sekian tahun otonomi di bawah kekuasaan Indonesia. Terlepas dari perbedaan pandangan itu, semua pihak setuju untuk melanjutkan pembahasan mengenai usulan otonomi tersebut.

Di Timor-Leste, mundurnya Soeharto menggairahkan CNRT, Falintil, dan pendukung kemerdekaan lainnya. Ribuan orang turun ke jalan-jalan untuk memperlihatkan keinginan mereka untuk merdeka, dan menentang usulan 'otonomi'. Kebanyakan sikap ini diungkapkan dengan cara damai, namun ada juga yang tidak. Pada November 1998 pasukan Falintil menyerang dan membunuh prajurit TNI di Alas, Kabupaten Manufahi. Sikap mendukung kemerdekaan yang terbuka dan serangan di Alas mulai membuat orang Indonesia dan Timor-Leste yang mendukung berlanjutnya kekuasaan Indonesia menjadi gelisah. Serangan di Alas dibalas dengan keras oleh pasukan TNI, di mana sekurangnya lebih daripada satu lusin penduduk sipil tewas (lihat ringkasan kabupaten: Manufahi). Pada masa ini pula, dimulailah mobilisasi kelompok-kelompok milisi baru.

Dengan latar seperti ini, pada 27 Januari 1999 Presiden Habibie secara tak terduga mengumumkan bahwa rakyat Timor-Leste akan diberi kesempatan mengungkapkan pandangan mereka mengenai masa depan politik wilayah itu.^{*} Saat memperjelas kebijakan baru itu, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan bahwa rakyat

* Pengumuman awal disampaikan pada 27 Januari 1999 oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. *Kompas*, 28 Januari 1999.

Timor-Leste akan ditanya apakah mereka menerima atau menolak usulan ‘otonomi’ di bawah kekuasaan Indonesia. Jika mereka menolak, katanya, Indonesia akan keluar dan Timor-Leste akan berdiri sendiri.

Keputusan ini tampaknya membuat semua pihak terkejut, termasuk mereka yang mendesak adanya penyesuaian kebijakan—terutama Perdana Menteri Australia John Howard yang pada Desember 1998 mengusulkan kepada Habibie suatu penentuan nasib sendiri setelah sekian tahun otonomi di bawah kekuasaan Indonesia. Keputusan itu juga mengejutkan bagi angkatan bersenjata Indonesia yang besar kekuasaannya. Pemeliharaan ‘persatuan nasional’ dengan segala cara telah lama menjadi inti dari ajaran militer Indonesia, dan para perwira yang paling senior jelas menentang kemerdekaan Timor-Leste.

Para pemimpin Angkatan Darat rupanya tidak menentang usulan Habibie dalam kabinet, tetapi tidak berarti bahwa mereka mendukungnya. Justru, seperti dibahas secara terperinci dalam bagian lain laporan ini, ada bukti bahwa perwira-perwira militer yang masih aktif dan sudah pensiun saat itu mulai menyusun rencana untuk menggagalkan proses itu, atau, jika itu tidak mungkin dilakukan, menjamin kemenangan opsi pro-otonomi. Meningkatnya mobilisasi kekuatan milisi pada akhir 1998 dan awal 1999 lebih daripada sekadar kebetulan.

UNAMET dan Jajak Pendapat

Pengumuman Indonesia pada 27 Januari 1999 itu juga mengubah kerangka acuan untuk kelanjutan perundingan yang disponsori oleh PBB. Fokusnya mulai berubah dari perincian paket ‘otonomi’, ke cara-cara menghimpun pendapat rakyat Timor-Leste mengenai status politik wilayah itu. Pergeseran itu meletakkan dasar bagi keterlibatan langsung PBB dalam menyelenggarakan pemungutan suara mengenai masa depan politik Timor-Leste.

Hal yang mengejutkan bagi para perunding PBB dan Portugal, pada Maret 1999 Indonesia siap menerima usulan tentang pemungutan suara secara langsung, walaupun menolak penggunaan istilah ‘referendum’. Setelah perubahan ini, perundingan dengan cepat mengarah pada perumusan serangkaian kesepakatan yang dikenal dengan sebutan Kesepakatan 5 Mei, yang ditandatangani oleh Indonesia, Portugal, dan Sekretaris Jenderal PBB. Kesepakatan itu menguraikan kerangka konstitusional bagi status Timor-Leste di masa mendatang, dan memberi kepercayaan kepada PBB untuk menyelenggarakan ‘Konsultasi Rakyat’ di Timor-Leste mengenai usulan tersebut.*

.....
* Isi selengkapnya dari kesepakatan itu terdapat dalam *Report of the Secretary-General (A/53/951-S/1999/513)*, 5 Mei 1999. Laporan itu berisi “Annex I: Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor” (kesepakatan utama) yang padanya dilampirkan “A Constitutional Framework for a Special Autonomy for East Timor” (proposal otonomi); “Annex II: Agreement Regarding the Modalities for the Popular Consultation of the East Timorese Through a Direct Ballot” (kesepakatan tentang pelaksanaan); dan “Annex III: East Timor Popular Consultation” (kesepakatan keamanan).

Kesepakatan utama, yang ditandatangani Indonesia dan Portugal serta disaksikan oleh PBB, menyatakan bahwa rakyat Timor-Leste akan ditanya apakah mereka menerima atau menolak paket otonomi. Penolakan paket itu, seperti tertera dengan jelas dalam kesepakatan tersebut, akan menempatkan Timor-Leste dalam jalur menuju kemerdekaan. Kedua pilihan pada pemungutan suara itu dirumuskan sebagai berikut: “Apakah Anda *menerima* usulan otonomi khusus bagi Timor-Leste dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?” atau “Apakah Anda *menolak* usulan otonomi khusus bagi Timor-Leste, yang akan membawa Timor-Leste berpisah dari Indonesia?” Terlepas dari adanya kekhawatiran bahwa rumusan seperti itu akan menimbulkan kebingungan, bagian kesepakatan ini mendapat sambutan luas.

Kesepakatan mengenai keamanan—yang ditandatangani Indonesia, Portugal, dan PBB—jauh lebih kontroversial karena menempatkan tanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban selama dan sesudah Konsultasi Rakyat di tangan aparat keamanan Indonesia, dan khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kontingen PBB di Timor-Leste akan mencakup sebanyak 300 orang Polisi Sipil (Civpol – Civilian Police), tetapi hanya dalam kapasitas sebagai penasihat dan tidak akan membawa senjata. Kesepakatan ini menekankan tanggung jawab pihak berwenang Indonesia dalam menjamin suasana yang bebas dari kekerasan dan intimidasi serta kondusif bagi pelaksanaan Konsultasi Rakyat. Kesepakatan ini juga menekankan bahwa netralitas dan ketidakberpihakan mutlak dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri sangat diperlukan dalam hal ini.

Terlepas dari ketentuan itu, potensi bahaya dari kesepakatan keamanan itu tidak luput dari perhatian para pengamat luar, maupun dari mereka yang terlibat dalam perundingan mengenyainya.⁶ Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan jelas sangat khawatir mengenai kesepakatan itu dan karena itu dalam sebuah memorandum, yang diserahkan kepada pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut, ia menjabarkan sejumlah kriteria yang digunakannya untuk menilai apakah situasi keamanan dapat diterima atau tidak.⁷ Kriteria ini mencakup pelarangan segera terhadap pertemuan umum oleh kelompok bersenjata, penangkapan dan penghukuman segera terhadap mereka yang memicu atau mengancam penggunaan kekerasan, dan penarikan pasukan militer Indonesia. Ia juga mengatakan dengan jelas bahwa ia akan menghentikan proses jika kriteria tersebut tidak dipenuhi.

Dengan jaminan yang rentan itu, pada akhir Mei 1999 PBB mulai merekrut dan menempatkan personalnya di Timor-Leste dengan tujuan menyelenggarakan referendum pada awal Agustus. Bendera PBB dinaikkan di muka markas misi PBB di Dili pada 4 Juni, dan seminggu kemudian, pada 11 Juni, Dewan Keamanan mendirikan United Nations Mission in East Timor (Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste), yang lebih dikenal dengan sebutan UNAMET.

.....
⁶ Tentang perundingan-perundingan yang berlangsung, lihat Tamrat Samuel, “East Timor: The Path to Self-Determination,” dalam Chandra Lekha Sriram dan Karin Wermester, penyunting, *From Promise to Practice: Strengthening UN Capacities for the Prevention of Violent Conflict*, Boulder: Lynne Reiner, 2003.

⁷ Kriteria tersebut sesungguhnya telah diuraikan dalam surat dari Sekretaris Jenderal PBB kepada Presiden Indonesia Habibie, tetapi ketika Menteri Luar Negeri Alatas menolak menerima surat itu, surat itu diserahkan kepada kedua belah pihak dalam bentuk memorandum.

Misi itu dipimpin oleh Ian Martin, yang secara resmi menyandang jabatan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (SRSG – Special Representative of the Secretary-General). Komponen utama UNAMET adalah: Polisi Sipil (Civpol), Perwira Militer Penghubung (MLO – Military Liaison Officers), Urusan Pemilihan, Urusan Politik, Keamanan, dan Administrasi. Di markas PBB di New York, operasi UNAMET dikoordinasikan dan diawasi oleh Departemen Urusan Politik. Hubungan diplomatik tingkat tinggi dengan pihak Indonesia ditangani oleh Duta Besar Jamsheed Marker, yang telah menjadi Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Timor-Leste sejak 1997.

UNAMET membuka markasnya di ibukota Timor-Leste, Dili, dan delapan kantor daerah untuk menjangkau 13 distrik administratif (kabupaten) di wilayah itu. Petugas ditempatkan atau secara teratur mengunjungi sebagian besar subdistrik (kecamatan) dan desa di wilayah itu, untuk menyelenggarakan pendidikan pemilih, mendaftarkan para pemilih, memantau situasi politik dan hak asasi manusia, memberi saran kepada dan berhubungan dengan pasukan-pasukan Polri dan pihak TNI mengenai masalah keamanan, dan akhirnya melaksanakan pemungutan suara itu sendiri.

Selain urusan politik, logistik, dan administratif yang penting, urusan UNAMET yang paling penting adalah merancang dan menjalankan sistem pendaftaran pemilih yang bisa dipercaya dalam kerangka waktu yang begitu ketat yang tertera dalam Kesepakatan 5 Mei. Pekerjaan itu dilakukan dengan sangat cepat oleh Kantor Urusan Pemilihan UNAMET. Namun pada 22 Juni Sekretaris Jenderal PBB mengumumkan penundaan batas pendaftaran (dan juga pemungutan suara) selama tiga minggu karena alasan operasional dan keamanan. Kekhawatiran mengenai masalah keamanan, dan khususnya terus berlanjutnya kekerasan oleh milisi pro-Indonesia, berakibat penundaan lagi selama tiga hari pada pertengahan Juli, dan juga adanya kemungkinan untuk menunda lagi, dan bahkan membatalkan, jika situasi tidak berubah secara substansial semasa pendaftaran.

Akan tetapi terlepas dari berbagai kekhawatiran ini, pendaftaran pemilih dimulai pada 16 Juli dan terus berjalan tanpa jeda melewati tanggal 25 Juli yang merupakan titik tengah, berdasarkan pemahaman bahwa pihak berwenang Indonesia akan terus memperbaiki suasana keamanan dan keadaan pengungsi dalam negeri (IDPs – *Internally Displaced Persons*). Pendaftaran berakhir 6 Agustus, setelah diundurkannya selama dua hari dari rencana 20 hari karena desakan dari sebagian pejabat Indonesia dan sejumlah pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia. Terlepas dari ancaman terus-menerus dan aksi kekerasan oleh milisi pro-Indonesia selama periode ini, 446.666 orang mendaftar untuk memilih, suatu jumlah yang secara substansial melampaui perkiraan sebelumnya.*

Pendaftaran diikuti dengan periode kampanye resmi yang berlangsung sekitar dua minggu, dari 14 sampai 26 Agustus. Kampanye itu diatur oleh suatu peraturan

* Jumlah itu mencakup 433.576 orang di Timor Timur dan 13.090 orang yang mendaftar di pusat-pusat pendaftaran di luar wilayah ini.

yang dibuat di bawah pengawasan UNAMET dan diawasi oleh komite-komite yang beranggotakan wakil dari masing-masing pihak. Selama periode ini, UNAMET juga bekerja agar pasukan prokemerdekaan dan pro-Indonesia “meletakkan senjata”. Namun terlepas dari usaha-usaha semacam itu, periode kampanye terus diwarnai tindak kekerasan yang serius, terutama dari pihak pro-otonomi. Pada hari terakhir kampanye pro-otonomi misalnya, sekurangnya delapan orang tewas dibunuh di kota Dili saja (lihat ringkasan kabupaten: Dili).

Sebagai usaha membatasi atau menghalangi konflik yang berdarah, pada Agustus Xanana Gusmão memulai tindakan ‘kantonisasi’ (*cantonment*) sepihak pasukan-pasukan prokemerdekaan. Pada 12 Agustus, Falintil sudah menarik pasukannya ke empat tempat kantonisasi dan memberikan komitmen bahwa mereka akan tetap tinggal di sana selama proses pemungutan suara. Kelompok milisi pro-Indonesia yang didukung oleh pihak berwenang Indonesia menolak mengikuti contoh itu. Antara 16 dan 19 Agustus, milisi melakukan serangkaian ‘upacara kantonisasi’, di mana mereka menyerahkan sejumlah senjata, samasekali bukan semuanya, kepada kepolisian dan militer Indonesia. Namun dalam kenyataannya milisi terus beroperasi tanpa halangan, dan senjata-senjata yang mereka serahkan kemudian dikembalikan kepada mereka.

Terlepas dari kekhawatiran akan adanya kekerasan yang serius, pemungutan suara berjalan seperti direncanakan pada 30 Agustus. Mengejutkan bagi banyak pihak, pada hari itu hanya terjadi sedikit tindak kekerasan, dan 98,6% pemilih memberikan suara. Namun, bisa disesalkan bahwa kedamaian itu tidak berlangsung lama. Begitu pemungutan suara selesai dilakukan, milisi mulai menyerang orang-orang yang mereka anggap pendukung kemerdekaan. Korban-korban pertama serangan ini termasuk staf lokal UNAMET yang dibunuh ketika membawa kotak suara dari tempat pemungutan suara ke kendaraan mereka.

Sekretaris Jenderal PBB mengumumkan hasil pemungutan suara itu pada pagi hari 4 September. Mayoritas pemilih (78,5%) memberikan suara menolak otonomi dan memilih kemerdekaan. Dalam beberapa jam setelah pengumuman, milisi pro-otonomi dan prajurit-prajurit TNI turun ke jalan dan mulai melancarkan kekerasan yang tingkat kekejamannya belum pernah terjadi sebelumnya. Rumah-rumah pribadi, bangunan-bangunan umum, dan infrastruktur dibakar serta dihancurkan secara sistematis. Lebih daripada 400.000 orang dipaksa meninggalkan rumah mereka dan lari ke bukit-bukit, atau dipindahkan secara paksa oleh TNI dan unit-unit milisi ke luar Timor-Leste.

Peristiwa-peristiwa ini terjadi bersamaan dengan dua perubahan penting dalam rantai komando di Timor-Leste. Perubahan pertama terjadi pada 4 September, ketika TNI mengambil alih tanggung jawab atas semua operasi keamanan di wilayah itu, dan secara resmi menggeser Polri dan pihak berwenang sipil ke peran pendukung. Komando baru ini dinamakan Ko-ops Nusra (Komando Operasi TNI Nusa Tenggara). Ko-ops Nusra dipimpin oleh Mayor Jenderal Adam Damiri, Panglima Kodam IX Udayana yang membawahi Timor-Leste.

Perubahan kedua terjadi saat Presiden Habibie mengumumkan status Darurat Militer di wilayah itu, yang mulai berlaku tepat tengah malam 7 September. Setelah tanggal itu, semua operasi militer, kepolisian, dan sipil di Timor-Leste secara resmi berada di bawah kendali Penguasa Darurat Militer, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, yang bertanggung jawab langsung pada Presiden Habibie sebagai Panglima Tertinggi.^{*}

Walaupun ada perubahan-perubahan seperti itu, kekerasan terus meningkat. Akibatnya misi UNAMET terpaksa mengungsikan stafnya keluar dari Timor-Leste pada dini hari 14 September 1999. Sekitar 1.400 penduduk sipil Timor-Leste yang mencari perlindungan di markas PBB itu juga diangkut dengan pesawat ke tempat yang aman. Kekerasan dan penghancuran semakin tidak terkendali setelah kepergian misi, meskipun ada seruan berulang-kali kepada pemerintah Indonesia untuk mengendalikan keadaan dan menjalankan kewajibannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Pada 12 September pemerintah Indonesia secara resmi menyetujui kehadiran pasukan penengah internasional di Timor-Leste. Pasukan ini yang dikenal dengan sebutan International Force for East Timor (INTERFET – Pasukan Internasional untuk Timor-Leste) mulai diturunkan pada 20 September dan langsung mulai menegakkan hukum dan ketertiban serta membantu pembagian bantuan kemanusiaan. Pada Oktober 1999 DPR di Indonesia mencabut undang-undang yang menyatakan Timor Timur sebagai provinsi Indonesia, dan pada akhir bulan yang sama, pasukan Indonesia ditarik seluruhnya dari wilayah tersebut.

Indonesia: kekuasaan dan strategi

Terlepas dari berbagai perubahan dramatis yang terjadi pada 1998-1999, tanggapan resmi Indonesia terhadap prospek pemungutan suara di Timor-Leste dibentuk oleh sikap dan struktur kekuasaan politik dan militer, yang sudah mapan selama sekurangnya tiga dasawarsa. Sikap dan struktur kekuasaan ini menjadi latar dan memperlancar terjadinya pelanggaran sistematis hak asasi manusia pada 1999.

Lembaga kunci di dalam struktur kekuasaan ini adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia). Sekalipun ada tantangan terhadap wewenangnya, mengiringi kejatuhan Soeharto, pada 1999 TNI tetap merupakan lembaga politik terkuat di Indonesia dan pengaruhnya amat besar di Timor-Leste. Kekuasaan unik TNI, dan segi-segi tertentu dari doktrin, struktur,

^{*} Walaupun secara resmi bertugas sejak 7 September, tampaknya Mayor Jenderal Syahnakri tidak memegang komando efektif di Timor Timur sampai beberapa hari kemudian. Ketika Kepala Misi UNAMET Ian Martin pergi ke markas Korem pada malam hari pada 8 September, misalnya, ia mendapati Mayor Jenderal Damiri masih bertugas. Satu sumber yang bisa dipercaya mengatakan kepada Martin bahwa Kiki Syahnakri tidak mengambil komando efektif sebelum perintah tertulisnya datang dari Jakarta beberapa saat setelah 8 September. Komunikasi pribadi dengan Ian Martin, tanggal 1 Juni 2003. Menurut keterangan lain, Kiki Syahnakri mengambil komando efektif pada pukul 11 malam tanggal 9 September. Lihat Don Greenlees dan Robert Garran, *Deliverance: The Inside Story of East Timor's Fight for Freedom*, Crow's Nest, NSW: Allen & Unwin, 2002, halaman 229.

serta prosedur operasionalnya, secara bersama-sama menjelaskan pola pelanggaran hak asasi manusia pada 1999. Khususnya yang terpenting adalah doktrin ‘pertahanan rakyat semesta’, struktur komando teritorial, dominasi pasukan khusus serta unit intelijen, dan kecenderungannya memobilisasi pasukan-pasukan milisi sebagai perpanjangan tangan.

Tetapi, strategi Indonesia untuk memenangkan pilihan ‘otonomi’ bukanlah semata-mata strategi militer atau paramiliter. Strategi itu juga bersandar pada sejumlah lembaga lain, termasuk Polri dan aparat pemerintah sipil. Berada di bawah kendali TNI, dan karena itu tidak dapat atau tidak mau menentang strateginya, Polri menyumbang pada terjadinya kekerasan, terutama karena gagal mengambil tindakan efektif untuk mencegahnya. Demikian pula, aparat pemerintah sipil turut berkontribusi dengan melaksanakan kampanye resmi untuk ‘menyosialisasikan’ pilihan otonomi. Akhirnya, strategi ini bermuara pada mobilisasi kelompok-kelompok politik baru pro-Indonesia, seperti FPDK (Front Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan BRTT (Barisan Rakyat Timor Timur) dan berbagai badan khusus pemerintah, yang bersama-sama menjadi selubung bagi upaya resmi untuk memengaruhi hasil pemungutan suara dengan cara-cara damai maupun kekerasan.

Tentara Nasional Indonesia

Dalam Kesepakatan 5 Mei, Tentara Nasional Indonesia (TNI) diharuskan bersikap samasekali netral dalam kaitannya dengan Konsultasi Rakyat. Namun, karena kekuasaan politik TNI yang begitu dalam di Indonesia maupun Timor-Leste, pola perilaku kekuatan milisi yang sudah berlangsung lama, dan perasaan berkeberatan para perwira dan prajurit mengenai masalah ini, keharusan tersebut sesungguhnya tidak masuk akal.

TNI tidak pernah benar-benar ‘profesional’ dalam arti menjadi lembaga apolitis yang menjalankan perintah dari pimpinan politik sipil. Sejak kelahirannya dari perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan dari penguasa kolonial Belanda (1945-1949), angkatan bersenjata Indonesia—dan khususnya Angkatan Darat—selalu berperan penting dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi negara. Kekuasaan politik militer menjadi semakin kuat bercokol selama rezim Orde Baru Presiden Soeharto (1965-1998). Bahkan setelah Soeharto mundur pada 1998, TNI tetap menjadi lembaga yang paling kuat di seluruh negeri dan di Timor-Leste.

Di jantung kekuasaan TNI, baik di Indonesia maupun Timor-Leste, terdapat ciri-ciri unik dalam struktur komandonya. Salah satunya adalah organisasi teritorialnya. Pada 1999, sekitar dua per tiga kekuatan TNI tersebar di seluruh negeri dalam suatu struktur yang turun sampai ke tingkat desa. Wilayah seluruh negeri dibagi ke dalam sepuluh Komando Daerah Militer (Kodam). Setiap Kodam kemudian dibagi ke dalam unit-unit komando geografis yang lebih kecil yang dikenal dengan nama Komando Resor Militer (Korem); Komando Distrik Militer (Kodim); dan Komando Rayon Militer (Koramil). Di tingkat desa, TNI diwakili oleh seorang Bintara Pembina Desa atau Babinsa.

Pada 1999 Timor-Leste berada di bawah kewenangan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana, yang bermarkas di Bali. Kodam IX dipimpin oleh Mayor Jenderal Adam

Damiri. Timor-Leste sendiri dikendalikan oleh Komando Resor Militer (Korem) 164/Wiradharma yang dipimpin oleh Kolonel Tono Suratman dan setelah 13 Agustus, oleh Kolonel Noer Muis. Di bawah Korem, Timor-Leste (atau Timor Timur) dibagi menjadi 13 Komando Distrik Militer (Kodim 1627 sampai 1639), yang masing-masing dipimpin oleh seorang Komandan Kodim (Dandim), yang biasanya berpangkat Letnan Kolonel. Kodim lebih lanjut dibagi menjadi sekian Komando Rayon Militer (Koramil), yang masing-masing dipimpin oleh seorang Komandan Koramil (Danramil).

Melalui struktur komando militer teritorial inilah kebijakan dasar militer Indonesia dijalankan di Timor-Leste. Strategi militer Indonesia pada 1999 didasarkan pada suatu rencana strategis yang disebut “Operasi Tatoli IV Rem 164/WD.” Rencana-rencana operasional lain yang menjadi landasan kegiatan militer di Timor-Leste adalah rencana operasi Korem untuk referendum, yakni “Operasi Wira Dharma-99”; rencana evakuasi pascapemungutan-suara dari Kodam yang disebut “Operasi Cabut Kodam IX/UDY”; dan “Rencana Kontinjensi 1999-2000” yang disusun oleh markas besar TNI untuk menghadapi kemungkinan kekalahan Indonesia dalam Konsultasi Rakyat.[†]

Sistem komando militer teritorial ini berjalan sejajar dengan struktur otoritas politik sipil sampai ke tingkat desa—Komandan Korem membayangi Gubernur; 13 Komandan Kodim mengawasi 13 Bupati; 62 Komandan Koramil mengawasi 62 Camat; sementara 442 Babinsa bekerja dengan para Kepala Desa. Dengan begini, komando militer teritorial secara efektif menjamin keterlibatan dan dominasi militer dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada setiap tingkat. Jadi, walaupun pejabat sipil seperti gubernur dan bupati secara resmi memiliki wewenang, pada akhirnya para perwira militer di dalam komando teritoriallah yang memegang kekuasaan terbesar.

Di samping komando teritorial yang menjadi ciri kekuasaan Indonesia di manapun juga, ada sejumlah ciri unik dalam kekuasaan militer di Timor-Leste pada 1999, yang berasal dari sejarahnya yang lama sebagai daerah operasi militer yang aktif. Wilayah itu misalnya, memiliki dua batalion infanteri ‘organik’ yang bermarkas tetap di Timor-Leste. Batalion 744 yang bermarkas di Dili dan Batalion 745 yang bermarkas di Los Palos, dibentuk akhir dasawarsa 1970-an, tidak lama setelah invasi Indonesia. Walaupun banyak prajurit kedua batalion ini adalah orang Timor-Leste, para perwira umumnya adalah orang Indonesia. Kedua unit ini secara resmi berada di bawah Komandan Korem.[‡]

* Nama operasi menunjukkan bahwa operasi tersebut dikendalikan oleh Komandan Korem, sementara angka ‘IV’ menunjukkan bahwa tahun 1999 adalah tahun keempat dari operasi yang bersangkutan. Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Danrem 164/WD dan lain-lain. Telegram Rahasia STR/199/1999, 24 Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #40).

† Dalam beberapa dokumen TNI, ‘Rencana Kontinjensi’ ini disebut “Rencana Tindakan Menghadapi Kontinjensi Purna Penentuan Pendapat di Timtim [Jika] Opsi-1 Gagal.” Lihat: Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI (Jenderal Wiranto), “Direktif Panglima TNI, Nomor: 02/P/IX/1999, tentang Komando Penguasa Darurat Militer Wilayah Timor Timur,” [8] September 1999 (Koleksi HRU, Doc. TNI #9). Untuk pembahasan lebih lanjut tentang berbagai rencana pascapemungutan suara lihat Bab 5.

‡ Lihat: Dan Yonif 744/SYB (Mayor Yakraman Yagus) kepada Danki Yonif 744/SYB dan lain-lain. Telegram Rahasia No. TR/74/1999, 30 Januari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #5).

Kesatuan-kesatuan pasukan 'teritorial' dan 'organik' ini dilengkapi dengan pasukan tempur yang didatangkan dari tempat-tempat lain untuk melaksanakan pergiliran tugas di Timor-Leste. Jumlah pasukan tempur yang ditempatkan di Timor-Leste pada satu waktu selalu naik-turun, tetapi pada paruh pertama 1999 setidaknya ada sepuluh batalion tempur, yang membuat jumlah keseluruhan kekuatan pasukan TNI di wilayah itu melebihi 15.000 orang. Jumlah batalion tempur, dan keseluruhan kekuatan pasukan, meningkat secara substansial setelah penetapan keadaan Darurat Militer di Timor-Leste oleh Presiden pada 7 September 1999.

Kekuasaan militer di Timor-Leste dan strategi pemerintah pada 1999 juga mengandalkan dua kesatuan pasukan elite kontra-gerilya: Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad).^{*} Penting diperhatikan, kedua kesatuan ini bekerja di luar rantai komando teritorial yang normal, dan sering tanpa sepengetahuan para perwira teritorial.

Kostrad yang dibentuk sebelum kudeta 1965, berkembang menjadi pasukan pemukul yang kuat, dengan unit-unit yang ditugaskan menghadapi ancaman yang dianggap serius terhadap keamanan dalam negeri di Aceh, Papua, Timor-Leste, dan tempat-tempat lainnya. Terlepas dari reputasinya karena profesionalisme dan *esprit de corps*, unit-unit Kostrad ini dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Tetapi dengan pengumuman keadaan Darurat Militer di Timor-Leste, pada 7 September 1999, pasukan-pasukan Kostrad inilah yang diterjunkan untuk memulihkan ketertiban.[†]

Patut dicatat bahwa banyak pejabat tinggi TNI, yang bertanggung jawab komando di Timor-Leste pada 1999, memiliki latar belakang Kostrad. Mereka ini mencakup Panglima TNI Jenderal Wiranto; Kepala Staf Teritorial TNI Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono; Kepala Badan Intelijen ABRI/Badan Intelijen Strategis (BIA/BAIS) Letnan Jenderal Tyasno Sudarto; Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Sugiono; Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat yang kemudian menjadi Penguasa Darurat Militer di Timor Timur, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri; Asisten Operasi TNI Mayor Jenderal Endriartono Sutarto; dan Panglima Daerah Militer IX, Mayjen Adam Damiri.[‡]

Seperti Kostrad, Kopassus punya reputasi keahlian dalam metode-metode perang tidak konvensional, tetapi juga terkenal karena kebrutalannya dan penyalahgunaan kekuasaan, terutama di Timor-Leste. Pada awal 1999 Kopassus membentuk

.....
^{*} Untuk perincian sejarah, kekuatan, dan misi Kopassus dan Kostrad, lihat Lowry, *Indonesian Defence Policy*, halaman 40, 81-84, 93.

[†] Satu batalion penuh Kostrad ditempatkan di Dili pada saat itu, dan satu kompi penuh dari kesatuan tersebut ditugaskan melindungi markas UNAMET. Komandan pasukan Kostrad yang ditempatkan di UNAMET adalah Kapten Catur. Lihat: Dandim 1627/Dili (Letnan Kolonel Soedjarwo), "Data Kekuatan Pengamanan UNAMET dan Objek Vital," September 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #45). Panglima Kostrad pada 1999 adalah Letnan Jenderal Djamari Chaniago.

[‡] Untuk perincian latar belakang karier dari para perwira ini lihat Hamish McDonald et al., *Masters of Terror*, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University (Canberra Paper #145), 2002. Lihat juga di: <http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm>

sebuah satuan tugas khusus di Timor-Leste, yang dikenal sebagai Satgas Tribuana VIII di bawah pimpinan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat.^{*} Satgas Tribuana VIII ini mengendalikan jaringan perwira dan prajurit yang tersebar dalam kelompok-kelompok kecil di seluruh wilayah.[†] Walaupun Kopassus memiliki sejumlah pos yang tetap, kebanyakan perwira dan prajurit Kopassus beroperasi secara tertutup, sering dengan berpakaian sipil, dan terlibat terutama dalam pengumpulan informasi intelijen dan operasi kontra-intelijen. Ada dugaan yang bisa dipercaya, yang akan dibahas lebih terperinci dalam bagian lain laporan ini, bahwa sejumlah anggota milisi sesungguhnya adalah prajurit Kopassus yang sangat terlatih, yang bertugas memimpin anggota-anggota milisi lokal.

Di samping mereka yang secara aktif bertugas dalam kesatuan-kesatuan Kopassus di Timor-Leste, sejumlah pejabat senior militer dengan tanggung jawab komando di Timor-Leste memiliki latar belakang Kopassus. Mereka itu mencakup: Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo Hadisiswoyo; Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin; Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf TNI (dan kemudian Wakil Panglima Darurat Militer di Timor Timur) Brigadir Jenderal Amirul Isnaeni; Kepala Staf Kodam IX Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon; Komandan Korem Timor Timur sampai pertengahan Agustus 1999, Kolonel Tono Suratman; dan penggantinya, Kolonel Noer Muis.[‡]

Banyak menteri kabinet yang memegang tanggung jawab komando di Timor-Leste pada 1999 juga punya kaitan erat dengan Kopassus. Mereka mencakup: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal (Purnawirawan) Feisal Tanjung; Menteri Transmigrasi dan Peremukiman, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hendropriyono; Menteri Penerangan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Yunus Yosfiah, dan seorang penasihat militer Presiden Habibie, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Sintong Panjaitan.[§]

Berbagai pasukan tempur yang ditempatkan di Timor-Leste, termasuk Kopassus dan Kostrad, tampaknya memiliki struktur komando tersendiri yang terkait

* Berbicara kepada penyelidik Indonesia pada September 2000, Letnan Kolonel Sudrajat mengatakan bahwa dirinya menerima perintah penugasan ke Timor-Leste dari Komandan Kopassus pada 27 Januari 1999. Lihat Yayat Sudrajat, pernyataan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Tim Penyelidik Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Timor Timur, 12 dan 20 September 1999. Terjemahan (Koleksi SCU, Doc #C).

† Dalam pernyataan kepada para penyelidik Indonesia pada September 2000 Komandan Satgas Tribuana VIII, Letnan Kolonel Sudrajat, menyebutkan nama para komandan Kopassus di 8 dari 13 Kabupaten, yaitu: Letnan Rahmat Zulkarnaen di Lautém; Kapten Alfi Shari Lubis di Baucau; Letnan Aminton Manurung di Viqueque; Kapten Sugiyono di Manufahi; Sersan Tukiran di Ainaro; Letnan Masgen Abas di Ermera; Sersan Mulyono di Bobonaro; dan Letnan Kawan di Dili. Lihat: pernyataan Yayat Sudrajat, Koleksi SCU, Doc #C. Menurut sebuah laporan media tentang intelijen Australia yang bocor, pada September 1999 Kopassus telah membentuk regu pembunuh khusus yang disebut 'Kiper-9' untuk memburu dan menangkap para pemimpin prokemerdekaan dan tokoh-tokoh pro-Indonesia yang menyeberang. Lihat Hamish McDonald, "Australia's bloody East Timor secret," dan "Silence over crime against humanity," *Sydney Morning Herald*, 14 Maret 2002.

‡ Lihat *Masters of Terror*: <http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm>

§ Lihat *Masters of Terror*: <http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm>

dengan fungsi tempur mereka. Tidak seperti pasukan teritorial yang dibagi menjadi 13 Kodim, pasukan tempur yang ditempatkan di Timor-Leste dikelompokkan menjadi dua Komando Sektor, yakni “Sektor A” yang meliputi bagian timur wilayah itu, dan “Sektor B” yang meliputi kabupaten-kabupaten di bagian barat.” Masing-masing sektor dipimpin oleh seorang perwira berpangkat kolonel. Penting diperhatikan, semua komandan sektor dan wakil-wakil mereka berlatarbelakang Kopassus atau Kostrad, dan intelijen militer.[†] Struktur komando sektor ini adalah warisan sejarah panjang Timor-Leste sebagai daerah operasi militer, dan jelas dipertahankan untuk mempermudah operasi kontra-gerilya di sana. Ada indikasi bahwa komando sektor ini berperan penting dalam memobilisasi dan mengkoordinasi milisi-milisi pada 1999.

Terakhir, kekuasaan dan strategi militer di Timor-Leste bersandar pada jaringan intelijen yang tersebar di mana-mana. Para perwira dan unit-unit intelijen militer berperan penting pada setiap jenjang komando teritorial (Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil). Akan tetapi, para pelaksana operasi intelijen yang normal ini dilengkapi dan sering digantikan oleh “Satuan Tugas Intelijen” yang umumnya disebut SGI. Pada 1999, SGI tersebar di seluruh wilayah tetapi kebanyakan pekerjaannya—termasuk mobilisasi dan koordinasi kelompok-kelompok milisi—bersifat tertutup.[‡] Resminya SGI berada di bawah wewenang Korem.[§] Namun, pada praktiknya, SGI tampaknya dikendalikan dan dikoordinasikan oleh perwira-perwira Kopassus. Misalnya, komandan SGI pada 1999 adalah Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, yang juga menjadi komandan unit Kopassus di Timor-Leste, Satgas Tribuana VIII.[¶]

* Sektor Tempur A meliputi Kabupaten Baucau, Viqueque, Lautém, dan Manatuto. Sektor B meliputi Kabupaten Aileu, Ainaro, Bobonaro, Covalima, Ermera, Manufahi, dan Oecussi.

† Komandan Sektor A (sampai 21 Juni 1999) adalah Kolonel Sunarko, yang berlatarbelakang Kopassus dan intelijen militer. Ia digantikan oleh Kolonel Irwan Kusnadi, yang kariernya dilalui dalam Kopassus dan Kostrad. Sektor B dipimpin oleh Kolonel Tatang Zaenuddin, yang berlatarbelakang Kopassus dan intelijen militer. Wakil Komandan Sektor B adalah Letnan Kolonel Nyus Rahasia, juga seorang perwira karier Kopassus. Beberapa dokumen menunjukkan bahwa Komandan Sektor A selama masa Keadaan Darurat pada September 1999 adalah Kolonel Gerhan Lantara.

‡ Salah satu pos SGI yang diketahui adalah ‘Pos Nanggala-13’ di Baucau. Sebuah daftar nama rahasia para anggota milisi Sera yang dibuat oleh pos tersebut pada Januari 1998, memperlihatkan hubungan lama antara SGI dan kelompok-kelompok milisi. Lihat: Komandan Pos Nanggala-13, Satuan Tugas Intelijen (Sersan Mudji Maulani), “Daftar Nama Nama Anggota Sera (Surwan) Kec. Bagaia,” 2 Januari 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #2). Pos SGI yang lain adalah “Pos SGI Kresna 12” di Kecamatan Atsabe, Ermera. Komandan Pos tersebut, Amran Odhe, turut menandatangani sebuah dokumen yang memuat daftar nama 62 orang anggota milisi Aitarak di Desa Atudame, yang sekali lagi menegaskan hubungan antara SGI dan kelompok-kelompok milisi. Lihat: Kepala Desa Atudame, Danramil 04/Atsabe, Dan Pos SGI Kresna 12/Atsabe, dan lain-lain. “Daftar Nama-Nama Dari Markas Besar Komando Pasukan Aitarak Sektor B,” 22 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #20).

§ Lihat: Kepala Bagian Intelijen (Kapten Sarengat) untuk Komandan Satuan Tugas Intelijen, Korem 164/WD kepada Koordinator Judi, mengenai “Surat Panggilan,” 28 Mei 1998 (Koleksi SCU, Doc # 221).

¶ Pendahulu Letnan Kolonel Sudrajat sebagai Komandan SGI di Timor-Leste adalah Letnan Kolonel Wiyotomo Nugroho.

Setiap unit ini, dan khususnya SGI, memiliki jaringan mata-mata dan informan yang luas. Sistem ini memungkinkan angkatan bersenjata, khususnya Kopassus, dengan mudah melakukan pengintaian atau pengumpulan informasi terus-menerus, dan juga melancarkan operasi-operasi kontra-intelijen yang tertutup, termasuk menggalang kelompok-kelompok milisi.

Milisi

Salah satu unsur strategi pemerintah yang paling jelas dan memiliki dampak langsung bagi hak asasi manusia adalah penggalangan kelompok-kelompok milisi bersenjata untuk keperluan mempertahankan hubungan dengan Indonesia. Kelompok milisi sejak lama menjadi unsur integral dalam strategi kontrapemberontakan Indonesia di Timor-Leste maupun di tempat-tempat lain, sehingga penyebaran mereka yang tiba-tiba dengan kuat menunjukkan adanya keterlibatan militer.

Walau memiliki akar sejarah yang panjang, ada kelompok-kelompok yang baru digalang pada pertengahan 1998, tidak lama setelah Presiden Habibie mengumumkan pilihan 'otonomi' bagi Timor-Leste.^{*} Berita tentang kelompok-kelompok milisi baru itu mulai mengalir ke luar negeri akhir 1998 ketika perundingan yang disponsori PBB mengenai otonomi khusus bagi Timor-Leste mulai menghangat. Saat Presiden Habibie mengumumkan bahwa orang Timor-Leste bebas memilih antara otonomi dan kemerdekaan pada akhir Januari 1999, aliran itu berubah menjadi banjir. Dalam beberapa bulan saja, lebih daripada dua lusin kelompok milisi dibentuk, dan mereka dengan cepat menjadi alat utama untuk menekan penduduk agar memilih otonomi. Mereka juga menjadi pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagian kelompok yang tampil pada saat itu sudah ada selama bertahun-tahun, seperti Halilintar di Bobonaro, Tim Saka dan Tim Sera di Baucau, dan Tim Alfa di Lautém. Akan tetapi lainnya adalah kelompok milisi baru, seperti Besi Merah Putih yang bemarkas di Liquiçá, Aitarak di Dili, Dadurus Merah Putih di Bobonaro, Mahidi di Ainaro, Laksaur di Covalima, AHI di Aileu, dan ABLAI di Manufahi (Lihat Tabel 3: Kelompok Milisi Pro-Indonesia di Timor-Leste, 1999).

Mencerminkan hubungan erat mereka dengan TNI, kelompok-kelompok ini menggunakan retorika dan cara organisasi militer. Mereka diorganisasikan dalam 'kompi' dan 'peleton' dan anggotanya disebut sebagai prajurit atau pejuang kemerdekaan. Markas dari salah satu kelompok yang paling keji, Aitarak, menggunakan nama "Komando Pasukan Aitarak".[†]

^{*} Seorang mantan Sekretaris Jenderal Apodeti, Francisco Carvalho, dilaporkan memperlihatkan dokumen bertanggal 24 Juni 1998 kepada para jurnalis Australia yang dikatakan sebagai laporan Apodeti tentang suatu pertemuan dengan para perwira militer, dan pada pertemuan tersebut disusun rencana pembentukan pasukan milisi. Lihat ABC, *Four Corners*, "A License to Kill," 15 Maret 1999, transkripsi, halaman 11.

[†] Untuk perincian tentang struktur organisasi Aitarak, lihat: Wakil Panglima, Komando Pasukan Pejuang Integrasi (Eurico Guterres) kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Surat No. 55/SP/MK-AT/VI/1999, 30 Juni 1999 (Koleksi SCU, Doc #39).

Awal 1999 kelompok-kelompok milisi yang berbeda ini disatukan di bawah sebuah struktur bergaya militer, yang disebut Pasukan Pejuang Integrasi (PPI). PPI dipimpin oleh seorang tokoh lama pro-Indonesia, João Tavares, yang mendapat jabatan bergaya militer, 'Panglima'. Meniru lebih jauh organisasi militer, PPI terdiri atas tiga 'Komando Sektor', yang masing-masing dipimpin oleh seorang Wakil Panglima PPI.*

- Sektor A PPI meliputi kabupaten-kabupaten yang paling timur, yakni Baucau, Lautém, Viqueque, dan Manatuto, dan dipimpin oleh Joanico Cesario Belo, yang juga komandan milisi Tim Saka. Bintara Kopassus berpangkat Sersan Satu ini adalah anakbuah perwira Kopassus yang terkenal dan menantu Soeharto, Prabowo Subianto.†
- Sektor B yang mencakup kabupaten-kabupaten bagian tengah, Dili, Liquiçá, Ermera, dan Aileu, berada di bawah komando Eurico Guterres, yang juga menjadi komandan Aitarak. Laki-laki yang dulunya aktivis pendukung kemerdekaan ini, pada 1995 muncul sebagai ketua Gadapaksi, sebuah organisasi pemuda pro-Indonesia yang didirikan Kopassus dan ditugaskan mengganggu dan mengintimidasi anggota gerakan kemerdekaan.
- Sektor C yang meliputi kabupaten-kabupaten bagian barat, Bobonaro, Covalima, Ainaro, Manufahi, dan kantong Oecussi. Sektor ini dipimpin oleh Cancio Lopes de Carvalho, yang juga menjadi komandan kelompok milisi Mahidi. Carvalho punya hubungan erat dengan Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon, seorang perwira Kopassus yang pada 1999 menjadi Kepala Staf Kodam IX.

Tujuan resmi milisi mencerminkan suatu kekhawatiran mengenai hasil Konsultasi Rakyat, serta memperlihatkan pendekatan yang dogmatis dan sikap suka berperang. Misalnya, dalam sepucuk surat kepada komandan posnya tertanggal 30 Maret 1999, seorang anggota Aitarak mengungkapkan pandangannya tentang bulan-bulan yang akan datang:

“Aitarak yang mempunyai kekuatan 400 personel ini akan menghancurkan semua ancaman pihak anti-integrasi... Kalau toh memang ada yang mau minta merdeka, silakan saja mereka merdeka sendiri, tapi merdeka itu pasti akan diakhiri dengan pertumpahan darah. [...] Karena ini adalah prinsip daripada berdirinya tim Aitarak yang dipimpin oleh Bapak Eurico Guterres ini.”‡

* Sektor-sektor milisi yang berbeda dikemukakan secara ringkas dalam: Wakil Panglima, Komando Pasukan Pejuang Integrasi (Eurico Guterres) kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Surat No. 55/SP/MK-AT/VI/1999, 30 Juni 1999 (Koleksi SCU, Doc #39).

† Juga dikatakan bahwa Joanico adalah anak angkat seorang perwira karier Kopassus, Letnan Jenderal Luhut Panjaitan. Lihat Don Greenlees dan Robert Garran, *Deliverance: The Inside Story of East Timor's Fight for Freedom*, Crow's Nest, NSW: Allen & Unwin, 2002, halaman 132.

‡ Penulis surat ini adalah Mário Pinto da Costa. Lihat: Surat dari Mário Pinto da Costa kepada Komandan [Aitarak], 30 Maret 1999 (Koleksi SCU, Doc #262).

Para pejabat Indonesia menyatakan bahwa kelompok-kelompok milisi ini merupakan refleksi spontan dari dukungan penduduk lokal kepada integrasi, dan bahwa kekerasan merupakan akibat dari konflik antara orang Timor-Leste yang prokemerdekaan dengan yang prointegrasi. Karenanya, demikian menurut para pejabat Indonesia, lebih daripada sebelumnya TNI dan Polri sungguh-sungguh dibutuhkan untuk menjaga perdamaian. Sebagaimana yang akan dibahas secara terperinci dalam bab-bab selanjutnya, pernyataan tersebut menyembunyikan peran kunci TNI dalam menciptakan dan mendukung milisi yang melakukan kekerasan. Dengan demikian, hal tersebut memastikan pula bahwa hubungan TNI dengan milisi tetap utuh, dan bahwa pola sistematis pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari hubungan tersebut akan berlanjut tanpa halangan yang berarti.

Kepolisian Indonesia

Berdasarkan Kesepakatan 5 Mei, tugas memelihara keamanan selama Konsultasi Rakyat dipercayakan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tokoh kunci di lapangan di Timor-Leste adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kolonel Timbul Silaen. Di bawahnya terdapat 13 Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang masing-masing ada di setiap kabupaten di Timor-Leste; dan sejumlah besar Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek).

Sebagai bagian dari tanggungjawabnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban, pada Agustus 1999 Kepolisian Daerah (Polda) menyusun sebuah rencana terperinci yang disebut Operasi Hanoin Lorosae II yang mencakup rencana untuk evakuasi setelah terjadinya pemungutan suara.^{*} Sebagian pengamat berpendapat bahwa rencana tersebut merupakan bukti bahwa kekerasan yang terjadi setelah pemungutan suara, dan khususnya pemindahan paksa penduduk sipil yang terjadi kemudian, telah direncanakan sebelumnya oleh para pejabat tingkat tertinggi. Namun penelaahan yang lebih teliti atas dokumen tersebut tidak mendukung kesimpulan tersebut. Seperti yang akan dibahas secara lebih mendalam pada Bab 5, apapun yang mungkin dikatakan orang tentang perilaku Polri, dokumen itu sendiri terbaca sebagai satu usaha untuk membuat rencana menghadapi kekerasan yang telah luas diperkirakan akan terjadi pada periode setelah pemungutan suara.

Berhadapan dengan tuduhan bahwa mereka tidak cukup berbuat untuk menghentikan kekerasan milisi, para pejabat Polri kadang-kadang mengeluhkan bahwa mereka sangat kekurangan tenaga, dan bahwa memelihara ketertiban dengan hanya sedikit pasukan adalah sebuah "tugas yang mustahil". Namun kenyataannya Polri telah menurunkan sejumlah besar petugas di Timor-Leste, dan jumlahnya terus meningkat pesat seiring dengan mendekatnya hari pemungutan suara. Misalnya rencana evakuasi seperti yang telah dikutip sebelumnya memperlihatkan adanya 6.704 petugas polisi yang ditempatkan di Timor-Leste pada Agustus 1999.

^{*} Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Timor Timur, "Rencana Operasi Hanoin Lorosae II," Rencana Rahasia No. Pol: Ren Ops/04/VIII/1999, Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).

Jumlah tersebut mencakup 3.876 anggota pasukan organik Polri dan 2.828 anggota yang diperbantukan dari kesatuan-kesatuan lainnya.*

Penjelasan yang lebih masuk akal tentang ketidakefektifan Polri dalam menangani kekerasan milisi adalah bahwa Polri berada di bawah kendali TNI dan, pada saat yang bersamaan, menyerap banyak budaya kelembagaan TNI. Polri sudah lama menjadi bagian dari angkatan bersenjata sampai April 1999, ketika Polri secara resmi dipisahkan. Namun bahkan setelah pemisahan ini, Polri tetap mempertahankan karakternya sebagai kekuatan polisi yang sangat militeristis, dan tetap berada di bawah kewenangan Menteri Pertahanan Jenderal Wiranto yang pada saat itu sekaligus menjabat Panglima TNI.

Karakter militer Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya tampak jelas dalam kesatuan pasukan elitnya, Brigade Mobil (Brimob) yang ditempatkan dalam jumlah besar di Timor-Leste. Menurut dokumen Polri yang dikutip sebelumnya, 2.497 orang atau hampir setengah dari petugas polisi yang ditempatkan di Timor-Leste pada Agustus 1999 berasal dari kesatuan Brimob. Dipersejajati dengan senjata otomatis, dan dengan pelatihan kontra-gerilya serta pengalaman lapangan sebelumnya, Brimob dulu dan sekarang adalah kesatuan paramiliter, dengan catatan pelanggaran berat hak asasi manusia di seluruh wilayah negeri.

Menanggapi kritik tentang merosotnya kondisi keamanan, Indonesia menempatkan lebih banyak lagi kesatuan Brimob di Timor-Leste seiring dengan mendekatnya Konsultasi Rakyat. Para pejabat Indonesia menyatakan bahwa penempatan ini akan membantu mengendalikan keadaan, tapi nyatanya tidak samasekali. Menurut berbagai kesaksian, bertambahnya pasukan Brimob ini hanya membuat keadaan menjadi semakin buruk. Sebagaimana akan dibahas lebih terperinci di dalam Bab 3, pasukan Brimob bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Polri di Timor-Leste pada 1999.

Pemerintah sipil dan kampanye sosialisasi

Satu bagian penting dari strategi pemerintah Indonesia pada 1999 adalah kampanye untuk “menyosialisasikan” usulan paket otonomi. Seperti yang digambarkan oleh para pejabat pemerintah, ‘sosialisasi’ adalah sebuah usaha penyuluhan masyarakat yang ditujukan untuk menjelaskan keuntungan-keuntungan pilihan otonomi bagi masyarakat Timor-Leste. Dalam praktiknya, ‘sosialisasi’ adalah serangan propaganda terencana, yang terdiri atas gabungan bujukan, ancaman, dan tindakan kekerasan yang dirancang untuk menekan para pegawai negeri sipil dan warga biasa untuk memilih agar kekuasaan Indonesia tetap berlanjut di Timor-Leste.

Di bawah selubung kampanye ‘sosialisasi’ para pejabat pemerintah sipil menggunakan kewenangan jabatannya untuk menekan para pegawai negeri dan warga lainnya untuk mendukung pilihan otonomi, dan menganiaya mereka yang mendukung kemerdekaan. Dalam sejumlah kasus, nama-nama pendukung kemerdekaan dicatat dan diserahkan kepada pejabat intelijen militer.

* Ibid.

Sejak awal pertengahan 1998 Gubernur Timor Timur, Abilio Osório Soares, sudah mulai melancarkan tuntutan dan ancaman terhadap para pegawai negeri sipil yang tidak setia. Sebuah laporan rahasia intelijen militer Indonesia tertanggal 23 Juni 1998, melaporkan tentang pernyataan Gubernur pada sebuah pertemuan kelompok prointegrasi, Gadapaksi, dengan mengutip apa yang dikatakannya:

“Pada tanggal 23 Juni 1998 saya akan mengumpulkan [pegawai negeri] Eselon IV ke atas kalau mereka tidak mau mendukung integrasi silakan buka baju ...”

Tindakan-tindakan semacam itu secara tersurat diperintahkan oleh Gubernur dalam surat edaran tertanggal 28 Mei 1999, yang dibagikan kepada semua kepala instansi pemerintahan di Timor-Leste, dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Indonesia. Surat edaran itu menyatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil yang mendukung kemerdekaan akan “dipecat.” Surat edaran itu lebih jauh menyatakan bahwa para pegawai negeri yang dicurigai melindungi simpatisan prokemerdekaan, akan diminta menandatangani pernyataan sumpah setia kepada pemerintah, dan diancam dengan pemecatan jika mereka kemudian terlibat dalam kegiatan prokemerdekaan.[†]

Semuanya ini bukanlah ancaman kosong. Mereka yang diketahui atau dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan memang dipaksa keluar dari pekerjaan dan dari rumah mereka, di bawah selubung kampanye ‘sosialisasi.’ Para petugas penegak aturan itu sering juga anggota milisi. Sepucuk surat dari seorang anggota milisi Aitarak kepada komandan posnya menunjukkan bahwa milisi menganggap tugas tersebut sebagai salah satu dari tujuan utama mereka:

“Kami tim Aitarak juga sekarang sudah bersikap tegas untuk mengadakan pemeriksaan dan penyitaan terhadap orang-orang anggota pegawai negeri sipil yang ingin ikut merdeka. Kami akan pecat mereka secara terbuka, pakaian KORPRI yang mereka pakai akan kami lepas dari mereka, kemudian juga mobil-mobil dinas yang plat merah entah beroda dua maupun yang beroda empat, kami akan tarik atau ambil semua. Sebab ini betul-betul sudah menjadi konsep untuk operasi yang akan kami adakan di dalam bulan April 1999 ini.”*

* Tuntutan Gubernur itu diulangi lagi oleh Ketua DPRD Tingkat I Timor Timur Armindo S. Mariano, yang mengatakan bahwa para pegawai negeri sipil yang tidak setia akan dipecat. Lihat: Dandim 1627 (Letnan Kolonel Endar Priyanto) kepada Danrem 164/WD dan lain-lain, “Laporan hasil pertemuan di Gada Paksi,” 23 Juni 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #3).

† Lihat: Gubernur Timor Timur kepada Para Kepala Instansi Vertikal dan Otonom Provinsi Dati I Timor Timur. Edaran No. 200/827/Sospol/V/1999, tentang “Tindakan terhadap PNS yang terlibat organisasi/kegiatan yang menentang Pemerintah RI,” 28 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #10). Salinan sumpah setia disimpan oleh Unit Hak Asasi Manusia UNMISSET di Dili.

‡ Surat Mário Pinto da Costa kepada Komandan [Aitarak], 30 Maret 1999 (Koleksi SCU, Doc #262).

Sesuai dengan statusnya sebagai salah satu unsur kebijakan pemerintah, kampanye 'sosialisasi' dibiayai sangat besar oleh pemerintah Indonesia (lihat Bab 8). Pertemuan dan rapat umum 'sosialisasi' diselenggarakan di seluruh Timor-Leste, dan dalam acara-acara ini para pejabat sipil dan militer berceramah panjang lebar tentang keuntungan otonomi. Ditopang oleh dana pemerintah, para jurubicara pemerintah memperkuat kata-kata mereka dengan membagi-bagikan beras, baju kaos, dan barang-barang lainnya, dan dengan menjanjikan lebih banyak barang yang sama bagi mereka yang mendukung kekuasaan Indonesia. Seorang pengamat yang terdaftar pada PBB berkomentar:

"Kami pergi ke satu rapat umum kelompok pro-otonomi ... di mana dua truk besar datang dengan kantong-kantong penuh berisi baju kaos, topi, bandana, bendera ... dan barang-barang itu kemudian dilemparkan kepada orang-orang di situ, dan mereka berebut mengambil barang-barang itu. Tak seorang pun dalam kampanye kelompok prokemerdekaan yang punya barang-barang seperti itu."

Pembagian beras kepada penduduk merupakan bagian yang sangat penting dari kampanye 'sosialisasi' pemerintah. Dokumen-dokumen rahasia militer mengungkapkan bahwa tujuan nyata dari pembagian beras adalah untuk memengaruhi opini penduduk berkaitan dengan Konsultasi Rakyat. Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bahwa sumberdaya dalam jumlah yang besar diarahkan untuk usaha ini, dan bahwa para perwira tinggi militer Indonesia terlibat dalam usaha ini. Dalam satu telegram rahasia kepada Jenderal Wiranto, tertanggal 6 Juli 1999, Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon (Kepala Staf Kodam IX) meminta pengiriman segera kapal TNI Angkatan Laut tipe Frost untuk mengangkat beras ke Timor-Leste. Telegram itu menjelaskan bahwa "pihak Pemda [pemerintah daerah] perlu segera menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat" karena pembagian pangan yang dilakukan oleh sejumlah 35 organisasi nonpemerintah akan memengaruhi hasil Konsultasi Rakyat.[†]

Bujukan semacam itu juga dilengkapi dengan ancaman terbuka maupun tertutup tentang akan adanya kekerasan jika pilihan otonomi kalah.[‡] Ancaman yang biasa muncul di dalam pertemuan 'sosialisasi' antara lain adalah seperti berikut: "Kalau otonomi menang, darah akan menetes, kalau kemerdekaan menang, darah akan mengalir!" Ancaman-ancaman semacam itu diperkuat dengan pernyataan-

* ABC, *Four Corners*, "Silenced Majority," transkripsi, halaman 4.

† Telegram rahasia dari Kepala Staf Kodam IX/Udayana (Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon) kepada Panglima Angkatan Bersenjata (Jenderal Wiranto), 6 Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK).

‡ Seperti tuntutan pemecatan terhadap para pegawai negeri sipil yang tidak loyal, ancaman kekerasan yang dikandungnya dimulai setidaknya sejak pertengahan 1998. Misalnya, ketika memberikan pengarahan pada suatu pertemuan Gadapaksi pada Juni 1998, Ketua DPRD Timor Timur, Domingos S. Mariano, dilaporkan mengatakan: "Pendapat saya kalau Referendum, pasti akan ada pertumpahan darah yang lebih besar bila dibandingkan pada tahun 1975." Lihat: Dandim 1627 (Letnan Kolonel Endar Priyanto) kepada Danrem 164/WD dan lain-lain, "Laporan hasil pertemuan di Gada Paksi," 23 Juni 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #3).

pernyataan terbuka para pemimpin pro-otonomi, dan lebih jauh lagi ditegaskan oleh kehadiran anggota milisi pro-otonomi bersenjata yang tampak mengancam. Memang, milisi secara efektif bertugas sebagai penguat kampanye ‘sosialisasi’—yang memastikan bahwa penduduk datang ke pertemuan umum dan mengancam atau menyerang secara fisik orang-orang yang menolak hadir di sana.

Kelompok-kelompok politik pro-otonomi

Satu unsur yang juga berhubungan dengan strategi pemerintah adalah dorongan pembentukan dan pendanaan atas sejumlah organisasi dan kelompok politik baru prointegrasi yang dipimpin dan dijalankan oleh orang Timor-Leste. Dua kelompok utamanya adalah Forum Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan (FPDK) dan Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT), keduanya didirikan di paruh pertama tahun 1999.⁷

Kedua kelompok ini menggunakan taktik yang sedikit berbeda. Sementara BRTT berusaha merangkul elite politik yang lebih tua sebagai anggota, FPDK berusaha memobilisasi unsur-unsur yang lebih muda.⁸ FPDK juga berhubungan dengan kelompok-kelompok milisi—yang mereka nyatakan sebagai hubungan ‘penasihat’—lebih dekat daripada BRTT, yang sebagian pemimpinnya merasa prihatin bahwa kekerasan yang dilakukan oleh milisi adalah sesuatu yang kontraproduktif.⁹ Walaupun ada perbedaan di antara mereka, FPDK dan BRTT menampilkan wajah rakyat Timor-Leste dari posisi pemerintah Indonesia. Dan ketika hari pemungutan suara mendekati, kedua kelompok tersebut bergabung ke dalam satu organisasi tunggal, yang dikenal sebagai United Front for East Timor Autonomy (UNIF, Front untuk Otonomi Timor Timur) yang tanpa keraguan membela posisi pro-Indonesia.¹⁰

Pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok politik ini mungkin ditujukan untuk membuktikan klaim resmi Indonesia bahwa konflik yang terjadi adalah antara rakyat Timor-Leste sendiri, dan pemerintah bertindak sebagai wasit yang netral. Namun pernyataan tersebut diperlemah oleh fakta bahwa para pemimpin

* FPDK secara resmi didirikan pada 27 Januari 1999 dan BRTT didirikan pada April 1999. Lihat: Ian Martin, *Self-Determination in East Timor: The United Nations, the Ballot, and International Intervention*, London: Lynne Rienner Publishers, 2001, halaman 43. Organisasi lain Forum Persatuan Timor Timur (FPTT) didirikan pada 7 Desember 1998 di bawah kepemimpinan Eurico Guterres. Tampaknya organisasi itu sudah dibubarkan suatu saat pada Januari 1999, dan digantikan oleh FPDK dan Aitarak. Lihat: Forum Persatuan Timor Timur (FPTT) kepada Danrem 164/WD. Surat tulisan tangan (rancangan surat?), meminta pendanaan TNI untuk aktivitas FPTT, [Desember] 1998 (Koleksi SCU, Doc #233); dan Ketua Umum Forum Persatuan Timor Timur (Eurico Guterres) kepada Kepala Biro Keuangan Pemda Tk I Timor Timur, 5 Januari 1999 (Koleksi SCU, Doc #159).

† *Far Eastern Economic Review*, 27 Mei 1999.

‡ Beberapa orang dari kelompok yang lebih tua memang berhubungan dengan FPDK, namun ada tanda-tanda ketegangan. Pada Juli 1999, tokoh yang sudah lama mendukung Indonesia, Hermínio da Silva da Costa, mengundurkan diri dari Dewan Penasihat FPDK. Ketika mengumumkan pengunduran dirinya ia meminta perhatian pada peran penting generasi aktivis prointegrasi yang lebih tua. *Suara Timor Timur*, 15 Juli 1999.

§ Pembentukan UNIF diumumkan dalam sebuah pernyataan bersama oleh FPDK, BRTT, dan PPI pada 23 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK).

FSDK, BRTT, dan UNIF sebagian besar adalah pejabat pemerintah Indonesia. Misalnya, pemimpin BRTT adalah Duta Besar Keliling Indonesia untuk masalah Timor Timur, Francisco Lopes da Cruz. Hubungan tersebut merupakan gejala dari fenomena yang lebih umum. Seperti yang ditulis oleh Ian Martin:

“Hubungan antara pemerintah daerah, FSDK, milisi, dan TNI sedemikian erat sehingga semuanya merupakan satu operasi tunggal untuk menandingi kegiatan-kegiatan prokemerdekaan dan memenangkan pilihan pro-otonomi.”

Di samping tujuan politik terbuka mereka, ada beberapa bukti bahwa kelompok-kelompok politik pro-otonomi ini juga menjalankan tujuan yang lebih tertutup—yakni sebagai saluran dana dan barang-barang untuk milisi. Sebagaimana diuraikan di bagian lain dalam laporan ini, FSDK dan BRTT menerima dana dan sumberdaya yang cukup besar dari sumber-sumber resmi, baik sipil maupun militer (lihat Bab 8).

Badan-badan khusus bentukan pemerintah

Bagian penting terakhir dari strategi pemerintah adalah pembentukan sejumlah badan politik khusus di Timor-Leste. Badan-badan ini—yang paling terkenal adalah Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS) dan Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (Satgas P3TT)—berfungsi sebagai semacam mesin propaganda. Satgas P3TT juga berfungsi sebagai selubung untuk pengoordinasian strategi tertutup pemerintah dan militer Indonesia.

KPS adalah produk ‘kesepakatan damai’ yang diperantarai oleh Panglima TNI Jenderal Wiranto dan ditandatangani oleh wakil-wakil dari kelompok prokemerdekaan dan kelompok pro-Indonesia di Timor-Leste pada 21 April 1999. KPS seolah-olah didirikan untuk memfasilitasi dialog di antara berbagai kelompok yang berbeda di Timor-Leste. Dalam kenyataannya, tugas KPS hampir tidak ada bedanya dengan jurubicara pemerintah Indonesia. Ini sebagian adalah akibat dari komposisi keanggotaan KPS yang sangat berat sebelah, berpihak pada pemerintah Indonesia dan kubu pro-otonomi,[†] selain itu juga akibat posisi yang sangat berpihak dari para wakil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia yang didatangkan untuk membentuk KPS.

Tingkah KPS dalam mengadakan kegiatan kehumasan tersebut yang menggelikan itu adalah bagian dari usaha lebih luas yang dilakukan pemerintah untuk menampilkan versinya tentang keadaan di Timor-Leste, dan pilihan yang diinginkannya, kepada khalayak Timor-Leste dan Indonesia. Dalam usahanya ini KPS dibantu oleh media

* Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, halaman 43.

† Para wakil dari pemerintah, TNI, Polri, dan masing-masing dari dua kelompok pro-otonomi bergabung, berhadapan dengan hanya dua orang utusan dari CNRT/Falintil. Satu-satunya wakil CNRT yang hadir dalam penandatanganan kesepakatan, Leandro Isaac, dibawa ke tempat pertemuan dari kantor polisi tempatnya berlindung setelah rumahnya diserang. UNAMET sepenuhnya disingkirkan dari KPS sebagaimana juga organisasi-organisasi lokal nonpemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya. Tentang komposisi dan kelemahan KPS, lihat Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, halaman 30-31, dan 70.

dalam negeri yang umumnya patuh—meliputi radio, televisi, dan media cetak. Kampanye pemerintah mencakup upaya-upaya disinformasi yang agaknya dengan sengaja dirancang KPS untuk mendiskreditkan UNAMET dan meletakkan dasar bagi penentangan di kemudian hari terhadap kredibilitas proses Konsultasi Rakyat.

Di samping rasa permusuhan mereka terhadap UNAMET, para jurubicara Indonesia dan pro-otonomi juga menyatakan bahwa UNAMET sengaja hanya mempekerjakan para pendukung kemerdekaan. Walaupun tanpa bukti, para jurubicara ini terus-menerus mengulang pernyataan ini dengan frekuensi yang meningkat ketika hari pemungutan suara semakin dekat dan segera dalam masa sesudahnya. Para pejabat militer dan pemerintah, serta para pemimpin pro-otonomi, juga mengeluarkan ancaman langsung maupun terselubung terhadap para staf lokal UNAMET yang menyebabkan beberapa dari mereka mengundurkan diri dan lari ke gunung-gunung.

Badan yang kurang terlihat tetapi lebih berpengaruh yang didirikan oleh pemerintah pada 1999 adalah Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (Satgas P3TT). Satuan Tugas, demikian nama yang dikenal umum, merupakan turunan dari kelompok nasional yang terdiri atas beberapa menteri (TP4 OKTT), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.^{*} Satuan Tugas itu sendiri dipimpin oleh seorang mantan wakil tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Agus Tarmizi, dan seperti badan yang membentuknya (TP4 OKTT), Satuan Tugas ini terdiri atas wakil-wakil dari beberapa Departemen dan lembaga pemerintah pusat lainnya.

Secara formal, Satuan Tugas ini mewakili kepentingan pemerintah Indonesia di Timor-Leste, dan bertugas sebagai penghubung langsung dengan UNAMET, dalam kaitannya dengan Konsultasi Rakyat. Namun, karena langsung melapor kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di Jakarta, Satuan Tugas juga merupakan sebuah saluran otoritas penting yang langsung di bawah kendali Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung.

Lebih jauh, kepemimpinan Satuan Tugas mencakup sejumlah perwira tinggi militer, baik yang aktif maupun pensiunan, dengan pengalaman panjang di Timor-Leste, dan latar belakang intelijen militer atau Kopassus atau keduanya. Mereka adalah: H.R. Garnadi, seorang pensiunan Mayor Jenderal Angkatan Darat, dengan latar belakang intelijen militer; dan Brigadir Jenderal Glenni Kairupan, yang pernah bertugas sebagai Wakil Komandan Korem di Timor-Leste di pertengahan dasawarsa 1990-an, dan dikatakan memiliki latar belakang Kopassus.[†]

* TP4 OKTT adalah singkatan dari Tim Pengamanan Pelaksanaan Penentuan Pendapat mengenai Otonomi Khusus Timor Timur. Badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 43 tanggal 18 Mei 1999. Lihat: Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata (Letnan Jenderal Sugiono) untuk Panglima TNI (Jenderal Wiranto), "Surat Perintah No. Sprin/1096/VI/1999," 4 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK Doc #28); dan Panglima TNI (Jenderal Wiranto), "Surat Perintah No. Sprin 1180/P/VI/1999," 16 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #29). Tim menteri TP4 OKTT terdiri atas: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, Kapolri, dan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS). Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, halaman 42.

† Anggota ketiga, Kolonel (Pol.) Andreas Sugianto pernah bertugas sebagai Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Timor Timur pada 1994-96. Dalam kedudukan itu, ia bekerjasama erat dengan sejumlah per-

Namun tokoh kunci dalam Satuan Tugas itu adalah Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim. Seorang perwira karier intelijen, Zacky Makarim bertugas sampai Januari 1999 sebagai kepala Badan Intelijen ABRI (BIA, yang namanya diubah menjadi Badan Intelijen Strategis—BAIS—pada April 1999). Secara resmi ditempatkan di posnya di Timor-Leste di awal Juni,^{*} Zacky telah terlibat dalam berbagai operasi militer dan politik di Timor-Leste beberapa waktu sebelumnya.[†] Di awal dasawarsa 1990-an, Zacky Makarim bertugas sebagai perwira intelijen militer di Aceh, di puncak operasi kontrapemberontakan, ketika Angkatan Darat memobilisasi kelompok-kelompok milisi untuk membantu usaha mereka menghancurkan gerakan kemerdekaan di Aceh. Sebagai perwira militer paling senior di Timor-Leste sebelum pemakluman Darurat Militer pada September 1999, Mayor Jenderal Zacky Makarim adalah kandidat yang paling mungkin untuk berperan sebagai koordinator lapangan keseluruhan untuk strategi pemerintah dan militer di Timor-Leste. Sejauh strategi tersebut melibatkan mobilisasi kelompok-kelompok milisi bersenjata, dan pelaksanaan tindak kekerasan sistematis terhadap penduduk sipil, Zacky Makarim juga tersangka utama di antara orang-orang yang membantu dan mendorong terjadinya kejahatan terhadap umat manusia.

Pelanggaran, korban, dan pelaku

Tidak ada keraguan lagi bahwa para pejabat Indonesia berusaha memengaruhi hasil Konsultasi Rakyat untuk kemenangan 'otonomi khusus'. Juga tidak ada keraguan pula bahwa berbagai tindak kekerasan yang sangat menggemparkan itu dilakukan dalam konteks rencana tersebut. Hal yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kekerasan itu merupakan tindakan spontan dari milisi lokal dan 'oknum-oknum' TNI, sebagaimana yang diklaim oleh pejabat-pejabat Indonesia, ataukah merupakan bagian integral dari sebuah operasi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh para pejabat Indonesia.

Jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut memerlukan penguraian yang cermat atas kekerasan yang terjadi dan analisis mengenai pola-pola yang mendasari kekerasan tersebut, serta variasi dari kekerasan itu. Bab ini adalah yang pertama dari tiga bab dalam laporan ini yang mengemban tugas tersebut. Bab ini menguraikan dan menganalisa pola-pola paling dasar dari kekerasan yang terjadi pada 1999, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini: Apa jenis pelanggaran yang dilakukan? Kapan pelanggaran itu terjadi? Siapa yang menjadi korban? Dan siapa yang menjadi pelaku?

wira TNI yang berperan penting pada 1999, mencakup Mahidin Simbolon dan Kiki Syahnakri, yang keduanya menjadi Komandan Korem 164 di pertengahan dasawarsa 1990-an, dan Glenni Kairupan yang bertugas sebagai Wakil Danrem pada saat itu.

* Mayor Jenderal Zacky Makarim secara resmi ditugaskan ke Timor-Leste sebagai anggota TP4 OKTT pada 4 Juni 1999. Perintah penugasannya (Surat Perintah No. Sprin/1096/VI/1999) dikeluarkan di bawah kewenangan Panglima TNI Jenderal Wiranto, tetapi ditandatangani oleh Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Sugiono (Koleksi Yayasan HAK, Doc #28).

† Ia dan Mayor Jenderal Kiki Syahnakri adalah anggota satu tim yang dikirimkan oleh markas besar TNI untuk menyelidiki pembantaian di Gereja Liquiçá pada April 1999. Lihat: Greenlees dan Garran, *Deliverance*, halaman 126-127.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu mengarah pada satu kesimpulan inti: sebagian besar tindak kekerasan yang dilakukan pada 1999 adalah bagian dari serangan yang luas dan sistematis terhadap penduduk sipil Timor-Leste, dengan sasaran mereka yang diyakini sebagai pendukung kemerdekaan. Dengan demikian, menurut hukum internasional tindakan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, tetapi juga merupakan kejahatan terhadap umat manusia.

Jenis-jenis Pelanggaran

Kejahatan terpenting yang dilakukan di Timor-Leste pada 1999 mencakup pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan penganiayaan, kekerasan seksual, pemindahan penduduk secara paksa, dan penghancuran harta benda. Tindakan-tindakan ini melanggar serangkaian hak asasi manusia fundamental, yang diakui oleh hukum internasional, termasuk hak untuk hidup, hak atas keamanan diri pribadi, hak atas integritas fisik, kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul, dan hak untuk memiliki harta-benda.

Pembunuhan di luar hukum:

Kejahatan paling terkenal yang dilakukan pada 1999 adalah pembunuhan di luar hukum terhadap sedikitnya 1.200 orang dan kemungkinan sebanyak 1.500 orang sepanjang tahun tersebut. Pembunuhan ini umumnya dilakukan oleh beberapa orang penyerang yang diperlengkapi dengan berbagai jenis senjata, termasuk pisau, parang, pedang, senapan rakitan, dan senjata otomatis.

Banyak dari korban dibunuh secara perorangan, tetapi jumlah yang cukup besar—mungkin sebanyak 400 orang—meninggal dalam pembunuhan massal. Banyak pembunuhan massal terjadi di tempat-tempat ibadah dan atau tempat pengungsian, termasuk gereja-gereja Katolik dan rumah para tokoh terkemuka. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Gereja Liquiçá; pembantaian di rumah Carrascalão; dan pembantaian di Gereja Suai.) Pembunuhan massal juga terjadi di kompleks TNI dan Polri, atau ketika para korban berada di bawah perlindungan mereka. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Cailaco; dan pembantaian di kantor polisi Maliana.)

Lazimnya metode pembunuhannya kejam. Korban dipukuli, dibacok dengan parang atau pedang, dan bagian tubuh para korban kadang-kadang sengaja dipotong, sebelum atau sesudah korban tewas. Bentuk pemotongan bagian tubuh yang paling umum adalah pemotongan salah satu telinga korban, namun terkadang bagian tubuh yang lain juga dipotong, dan beberapa korban juga sengaja dipinggal kepalanya. Dalam beberapa kasus, sisa tubuh yang dipotong (atau bagian tubuh hasil pemotongan) dari korban tewas ditinggalkan di tempat-tempat umum, sebagai usaha nyata untuk meneror penduduk. Dalam sebagian kasus lainnya, khususnya yang jumlah korbannya banyak, para pejabat berusaha keras menghilangkan mayat korban dan bukti-bukti lainnya.

Penyiksaan dan penganiayaan:

Seperti juga pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan penganiayaan selama bertahun-tahun telah menjadi bagian dari strategi dasar kontrapemberontakan pemerintah Indonesia di Timor-Leste maupun di tempat-tempat lain, sehingga tidaklah mengherankan bahwa tindakan tersebut umum dilaporkan terjadi pada 1999. Penyiksaan terhadap para tahanan biasanya berupa pemukulan dan melukai dengan menggunakan tongkat, parang, pisau, pedang, dan popor senapan.

Sebagaimana dinyatakan dalam laporan bersama oleh para Pelapor Khusus PBB, pada 1999 penyiksaan yang terjadi di Timor-Leste biasanya merupakan tindakan awal untuk membunuh atau upaya pembunuhan.^{*} Bukti terakhir menunjukkan bahwa penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi juga digunakan, seperti yang telah terjadi selama bertahun-tahun, sebagai metode untuk memeras informasi tentang gerakan prokemerdekaan.

Seperti yang terjadi di masa lalu, penyiksaan dan penganiayaan pada 1999 juga merupakan bagian dari strategi yang ditujukan untuk mengintimidasi dan meneror penduduk. Tujuan intimidasi tersebut berbeda-beda setiap waktu. Dalam waktu sebelum pemungutan suara, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi ditujukan terutama untuk meredam suara prokemerdekaan dalam kaitannya dengan pendaftaran dan masa kampanye, serta untuk memaksakan rekrutmen ke dalam kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia. Dalam masa setelah pemungutan suara, penyiksaan dan penganiayaan digunakan untuk memaksa atau “meyakinkan” penduduk untuk meninggalkan Timor-Leste.

Kekerasan berbasis gender:

Sebagaimana yang dinyatakan oleh para Pelapor Khusus PBB dalam laporannya, penyiksaan dan penganiayaan juga berlangsung dalam bentuk kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, perbudakan seksual, dan pelecehan seksual.[†] Pada 2001, Fokupers, sebuah organisasi nonpemerintah setempat, telah mendokumentasikan sekitar 182 kasus pelanggaran khusus gender yang terjadi pada 1999. Termasuk di dalamnya 46 kasus pemerkosaan, lima kasus upaya pemerkosaan, dan 16 kasus penyerangan seksual. Lebih daripada separuh dari 46 orang korban pemerkosaan, diperkosa secara berulang-kali, atau oleh lebih daripada seorang pemerkosa. Di samping itu, banyak perempuan yang diperkosa selama berbulan-bulan, dan kadang bertahun-tahun, setelah dipaksa menjadi budak seks oleh prajurit-prajurit TNI dan anggota milisi.[‡]

* United Nations, *Situation of Human Rights in East Timor*, 10 Desember 1999, paragraf 42.

† United Nations, *Situation of Human Rights in East Timor*, 10 Desember 1999, paragraf 42 dan 46-58.

‡ Termasuk di dalamnya adalah sekitar 20 orang perempuan yang dibawa ke Timor Barat setelah pembantaian di Gereja Suai pada 6 September. UNTAET, “Investigations by the Serious Crimes Unit on cases of abduction of East Timorese women during the 1999 conflict,” Dili, Mei 2001.

Dengan adanya keengganan yang bisa dipahami dari sebagian besar perempuan Timor-Leste untuk mengungkapkan pengalaman seperti itu, maka sangat mungkin bahwa jumlah sesungguhnya dari kasus pemerkosaan dan perbudakan seksual pada 1999 sangat jauh lebih tinggi daripada yang sejauh ini dilaporkan.^{*} Masalah laporan yang lebih rendah daripada kenyataan ini diperparah oleh adanya hambatan sosial, hukum, dan logistik untuk melakukan pendokumentasian dan penyelesaian masalah. Kaum perempuan Timor-Leste, seperti juga kaum perempuan di manapun, menderita rasa bersalah, rasa malu, dan pengucilan setelah mengalami penyerangan seksual. Sebagian di antara mereka juga ditinggalkan oleh suami, yang mengklaim, atau menyatakan secara tidak langsung bahwa istri mereka menyetujui pemerkosaan dan atau perbudakan seksual yang menimpa diri mereka.[†]

Para pelaku kejahatan kekerasan seksual sebagian besar adalah anggota milisi, tetapi hampir setengahnya adalah para prajurit dan perwira TNI.[‡] Dalam beberapa kasus, para anggota milisi dan prajurit TNI masuk ke rumah seorang perempuan muda dan, sambil mengacungkan senjatanya, mengancam untuk membunuh anggota keluarga si perempuan jika ia menolak berhubungan seks. Dalam kasus lainnya, para perwira TNI dan anggota milisi berkomplot untuk menculik beberapa perempuan, dan kemudian membagi-bagi mereka tak ubahnya seperti barang.

Terlepas dari identitas para pelaku, beberapa perincian tertentu tentang penyerangan ini menjadikannya jelas bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual bukanlah tindakan kebetulan, melainkan perbuatan yang direncanakan oleh atau dengan persetujuan pihak berwenang militer. Contohnya, pejabat-pejabat militer agaknya menunjuk perempuan-perempuan yang dianggap “pantas” untuk dijadikan sasaran perkosaan atau penyerangan seksual. Lebih lagi, sebagian pelaku memiliki akses pada teknologi kontrasepsi yang relatif canggih, termasuk obat-obatan yang mereka suntikkan kepada para korban sebelum mereka perkosa. (Lihat studi kasus: Penahanan sewenang-wenang dan pemerkosaan di Lolotoe.)

Pemindahan penduduk secara paksa:

Selain tindakan itu sendiri merupakan kejahatan, kekerasan seksual, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum juga merupakan bagian penting dari kejahatan yang lebih jauh berupa pemindahan penduduk secara paksa. Pemindahan secara paksa tersebut terjadi di Timor-Leste dalam dua gelombang besar. Dalam gelombang pertama, yang terjadi sebelum pemungutan suara, sebanyak 60.000 orang terusir

^{*} Fokupers mencatat bahwa “... halangan-halangan seperti pengucilan sosial, trauma akibat kejadian, dan takut akan penilaian masyarakat ... membuat proses pendokumentasian ... teramat sulit.” Fokupers, “Progress Report 1 – Gender-based Human Rights Abuses,” Dili, Juni 2000, halaman 3.

[†] Keadaan semakin sulit ketika pada awal September 1999 milisi melakukan pembakaran dan penjarahan terhadap kantor Fokupers, satu-satunya organisasi yang secara serius mendokumentasikan persoalan kekerasan berbasis gender pada 1999 dan seluruh catatan rekamannya dihancurkan.

[‡] Dari 46 kasus yang pemerkosaan yang didokumentasi oleh Fokupers, 18 di antaranya dilakukan oleh para prajurit TNI atau bersama-sama dengan anggota milisi. Lihat Fokupers, “Progress Report 1 – Gender-based Human Rights Abuses,” Dili, Juni 2000.

dari rumah mereka ke wilayah lain di Timor-Leste. Kedua, yang terjadi segera setelah pemungutan suara pada 30 Agustus, merupakan pemindahan terhadap sekitar 400.000 orang—atau sekitar setengah dari jumlah seluruh penduduk Timor-Leste. Lebih daripada 250.000 orang di antaranya dipaksa menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Timor Barat, Indonesia, dan beberapa pulau di sekitarnya, sementara sisanya mengungsi ke bukit dan hutan-hutan di Timor-Leste.

Dalam masa sebelum pemungutan suara, pemindahan paksa terutama terjadi akibat serangan kekerasan dan teror yang dilakukan oleh pasukan-pasukan pro-Indonesia terhadap tempat-tempat yang dianggap sebagai benteng prokemerdekaan. Bentuk serangan itu bermacam-macam, meliputi pembakaran rumah serta penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pemimpin prokemerdekaan. Dimulai pada akhir 1998, dan memuncak pada April 1999, serangan tersebut mengakibatkan penduduk seluruh desa menyelamatkan diri ke gunung atau ke kota-kota sekitarnya. Banyak yang mengungsi ke tempat-tempat ibadah, termasuk gereja-gereja di kota Liquiçá, Suai, dan Maliana. Sementara yang lain mencari perlindungan di rumah orang-orang terkemuka di Dili dan di tempat-tempat lainnya. Seperti dikemukakan di atas, banyak orang dibunuh di tempat-tempat ibadah dan pengungsian.

Pemindahan paksa penduduk juga mengancam gagalnya pelaksanaan Konsultasi Rakyat dan meniadakan hak pilih ribuan penduduk, dengan merusak rencana pendaftaran, pendidikan pemilih, dan pemungutan suara. Para pengungsi dalam negeri (Internally Displaced Persons—IDPs) ini, khususnya mereka yang menyingkir ke gunung-gunung, dapat dipahami akan enggan meninggalkan tempat-tempat pengungsian mereka untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Akhirnya, UNAMET berhasil membuat pengaturan khusus yang memungkinkan semua pengungsi itu, kecuali sejumlah kecil, untuk mendaftar dan memberikan suara.

Yang lebih serius lagi adalah pemindahan paksa hampir setengah dari penduduk Timor-Leste, kebanyakan ke Timor Barat, pada hari-hari dan minggu-minggu setelah pemungutan suara. Beberapa pengamat menyimpulkan,^{*} berdasarkan bukti-bukti yang terdokumentasi, bahwa pemindahan paksa penduduk merupakan bagian dari strategi yang direncanakan oleh para pihak berwenang Indonesia di tingkat yang paling tinggi. Meskipun ada alasan untuk berhati-hati dalam menarik kesimpulan tersebut hanya berdasarkan pada dokumen-dokumen yang tersedia, pola perilaku yang dilaporkan oleh banyak saksi mata, sepenuhnya mendukung pernyataan bahwa evakuasi paksa tersebut adalah sesuatu yang direncanakan dan terorganisasi dengan baik. (Lihat Studi Kasus: Pemindahan Paksa dan Pembunuhan Pengungsi di Dili.)

Pola evakuasi paksa itu pada dasarnya sama di seluruh wilayah Timor-Leste. Evakuasi ini dimulai segera setelah pemungutan suara dengan sebuah serangan

.....
^{*} Misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dan Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor-Leste, yang masing-masing laporannya diterbitkan pada Januari 2000.

intimidasi dan kekerasan yang dilakukan bersama oleh milisi dan prajurit TNI. Di seluruh wilayah Timor-Leste, kelompok-kelompok milisi dan prajurit dengan bebas menjelajahi desa-desa dan kota-kota, membakari rumah-rumah penduduk dan kantor-kantor, secara selektif memukuli atau membunuh tokoh-tokoh prokemerdekaan, dan mengancam penduduk bahwa mereka harus pergi—kalau tidak, akan mengalami nasib yang sama. Polisi turut serta dalam kekerasan atau enggan atau tidak mampu menghentikannya.

Para korban dan saksi dari tempat-tempat yang terpisah berjauhan di wilayah Timor-Leste melaporkan bahwa mereka diberitahu oleh petugas TNI dan Polri, dan juga milisi, bahwa mereka akan dibunuh, dan bila perempuan akan diperkosa, jika mereka tidak mau naik ke truk-truk atau ke kapal-kapal yang akan membawa mereka ke Timor Barat. Laporan-laporan mereka juga sama menyebutkan bahwa kendaraan-kendaraan yang digunakan dalam evakuasi disita paksa oleh para petugas militer dan milisi, dan bahwa uang diperas dari mereka yang dipaksa naik ke truk.

Berhadapan dengan kenyataan hancurnya hukum dan ketertiban, dan bahaya kematian yang dekat, banyak warga yang merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali pergi meninggalkan kampung halaman. Kepergian mereka didorong oleh aparat militer dan sipil yang mengatakan kepada penduduk bahwa keamanan mereka tidak akan dapat dijamin kecuali jika mereka pindah ke kantor-kantor polisi dan militer, dan tempat-tempat yang ditentukan di seluruh wilayah Timor-Leste. Pada tempat-tempat yang ditentukan, para pengungsi secara sistematis dinaikkan ke truk atau kapal, dan dikirim ke Timor Barat dan pulau-pulau yang berdekatan.

Persoalan ini tidak berhenti ketika para pengungsi meninggalkan Timor-Leste. Sebaliknya, mereka menghadapi kondisi yang penuh bahaya di dalam kamp-kamp pengungsi Indonesia di mana mereka ditempatkan. Masalah yang paling serius adalah bahwa anggota milisi yang telah meneror mereka untuk pergi juga berada di kamp-kamp tersebut dan mereka terus mengganggu, mengancam, dan mengintimidasi para pengungsi. Sebagaimana yang terjadi di Timor-Leste, pihak-pihak berwenang Indonesia, termasuk TNI, sangat sedikit melakukan usaha untuk mengendalikan milisi di dalam kamp-kamp pengungsian. Hasil yang dapat diduga adalah bahwa mereka bebas melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap para pengungsi, termasuk pemerkosaan, perbudakan seksual, dan pembunuhan.

Penghancuran harta benda:

Pelanggaran yang dilakukan pada 1999 juga mencakup penghancuran besar-besaran terhadap harta benda penduduk, dan khususnya pembakaran rumah-rumah serta pembunuhan hewan ternak. Sebagian penghancuran ini terjadi dalam konteks kegiatan teror sebelum pemungutan suara. Namun sebagian besar terjadi dalam periode tiga minggu setelah pemungutan suara 30 Agustus. Dalam masa yang singkat itu, setidaknya 70% dari seluruh bangunan di seluruh wilayah dibakar secara sengaja jika bukan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bisa lagi didiami. Bangunan-bangunan yang dihancurkan mencakup rumah-rumah

pribadi, toko-toko, kantor-kantor pemerintah, sekolah-sekolah, dan klinik-klinik kesehatan. Infrastruktur sangat penting, termasuk air, listrik, dan telekomunikasi juga dihancurkan atau dilumpuhkan.

Walaupun beberapa bagian dari wilayah Timor-Leste kehancurannya lebih parah daripada bagian lainnya, namun pola penghancurannya menunjukkan bahwa kekerasan terhadap harta benda itu direncanakan pada tingkat tinggi. Para saksi mata dari berbagai kota dan desa yang terpisah semuanya melaporkan bahwa pembakaran dan penghancuran dilakukan secara sistematis, dan juga dengan partisipasi penuh, atau dengan persetujuan prajurit TNI dan Polri. (Lihat ringkasan kabupaten.)

Penghancuran fisik pada skala ini mendatangkan konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan. Penghancuran ini membuat ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan tidak memiliki akses untuk mendapatkan pangan yang memadai. Penghancuran itu juga mengakibatkan mayoritas penduduk kehilangan akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan pendidikan. Dengan cara demikian, seperti dicatat oleh Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor-Leste dalam laporannya pada Januari 2000, penghancuran harta benda juga merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi.*

Kronologi kekerasan: Tiga periode

Pola pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada 1999 bervariasi secara signifikan sepanjang waktu. Dapat dibedakan adanya tiga periode umum, masing-masing dengan ciri-cirinya sendiri: (i) periode pra-UNAMET (Januari hingga akhir Mei); (ii) periode UNAMET (awal Juni hingga 30 Agustus); dan periode setelah pemungutan suara (30 Agustus hingga akhir Oktober).

Periode pra-UNAMET (Januari hingga akhir Mei):

Sebagian pelanggaran hak asasi manusia yang paling buruk terjadi di dalam periode pra-UNAMET, sebelum Timor-Leste menjadi fokus perhatian serius media dan dunia internasional. Kelompok-kelompok milisi mulai dibentuk pada pertengahan 1998, dan pada Januari 1999 bersama dengan kesatuan-kesatuan TNI, beberapa kelompok telah melancarkan kegiatan kekerasan dan intimidasi dengan sasaran para pendukung maupun yang dianggap pendukung kemerdekaan Timor-Leste.

Ketika semakin banyak kelompok milisi yang dibentuk, dan ketika pihak berwenang sipil dan militer memberikan dukungan logistik dan politik kepada milisi, kekerasan mengalami percepatan dan penyebarluasan. Di antara Januari hingga akhir Mei

* Komisi Penyelidik menyatakan bahwa berbagai hak sosial dan ekonomi "... dilanggar melalui penghancuran berskala besar, yang mencakup hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan tingkat hidup yang memadai, termasuk pakaian, makanan, perumahan, dan perawatan kesehatan serta hak untuk mendapatkan pendidikan." PBB, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, "Report of the International Commission of Inquiry on the Question of East Timor to the Secretary General," UN Doc A/54/726,S/2000/59, January 31, 2000. Lihat khususnya paragraf 20, 102-103, dan 142.

1999 beberapa puluh orang dibunuh di luar hukum, dan puluhan ribu dipindahkan secara paksa dari rumah-rumah mereka. Banyak dari mereka yang meninggalkan rumah mencari perlindungan di gereja terdekat atau di rumah pribadi tokoh-tokoh masyarakat. Terhadap orang-orang inilah, dan di tempat-tempat pengungsian inilah, sebagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dilakukan.

Di antara pelanggaran yang paling terkenal pada periode ini adalah tiga pembunuhan massal yang terjadi pada April 1999. Pertama, yang terjadi pada 6 April 1999, adalah pembantaian terhadap sedikitnya 60 orang di gereja paroki di kota Liquiçá. Yang kedua adalah eksekusi secara sengaja terhadap tujuh orang ketika mereka sedang dalam pengawasan prajurit dan perwira TNI, di Kecamatan Cailaco, Bobonaro. Ketiga, pembunuhan terhadap sedikitnya 12 orang yang mengungsi di rumah pendukung kemerdekaan yang terkenal, Manuel Carrascalão, di Dili pada 17 April. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Gereja Liquiçá; pembantaian di Cailaco, dan pembantaian di rumah Carrascalão.) Pembantaian-pembantaian ini terjadi hampir bersamaan waktunya dengan perundingan akhir yang berlangsung di New York yang akan mengarah pada Kesepakatan 5 Mei.

Periode UNAMET (awal Juni hingga 30 Agustus):

Situasi hak asasi manusia sedikit membaik setelah UNAMET dan sejumlah besar pengamat dan wartawan internasional mulai bertugas di seluruh wilayah Timor-Leste awal Juni 1999. Bila diukur dari jumlah orang yang terbunuh dalam tindak kekerasan politik, ada perbaikan penting. Akan tetapi, pelanggaran yang berat—termasuk penganiayaan, kekerasan seksual, dan pemindahan paksa—tetap berlanjut. Di pertengahan Juli 1999, UNAMET dan beberapa organisasi lain memperkirakan terdapat sekitar 60.000 pengungsi di dalam negeri dari jumlah penduduk 800.000 lebih sedikit.*

Pelanggaran yang paling umum dilaporkan selama periode UNAMET adalah intimidasi, pemukulan, dan pemindahan paksa terhadap mereka yang dianggap pendukung kemerdekaan. Di antara berbagai kasus yang terdokumentasi dengan baik pada periode ini adalah serangan milisi pada 29 Juni terhadap kantor UNAMET di kota Maliana, Kabupaten Bobonaro. Serangan tersebut mengakibatkan sejumlah orang terluka dan menyebabkan penghancuran harta benda yang cukup besar. Sebuah investigasi internal PBB menyimpulkan bahwa serangan itu diorganisasikan dan dikoordinasikan oleh komandan-komandan militer setempat, termasuk Komandan Komando Distrik Militer, dan serangan itu ditujukan untuk mengintimidasi petugas PBB. (Lihat studi kasus: Serangan terhadap UNAMET di Maliana.) Insiden lain yang terdokumentasi dengan baik yang khas periode ini adalah serangan milisi terhadap suatu konvoi bantuan kemanusiaan di kota Liquiçá pada 4 Juli 1999. (Lihat studi kasus: Serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan.)

* Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, halaman 57.

Situasi hak asasi manusia merosot semakin jauh di akhir Agustus, pada periode kampanye terbuka untuk pemungutan suara. Selain jumlah insiden pengancaman dan intimidasi yang lebih besar, serta gelombang baru pengungsian paksa, terdapat peningkatan mencolok jumlah pembunuhan di luar hukum.

Hari kekerasan yang paling buruk dalam periode UNAMET adalah 26 Agustus, hari terakhir kampanye pihak pro-otonomi. Insiden pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar khususnya terjadi di Dili, ketika pasukan-pasukan pro-otonomi dari seluruh negeri berkumpul dalam jumlah besar dan melancarkan kegiatan agresif. Pada hari itu di Dili setidaknya delapan orang dibunuh. Seluruh korban, kecuali satu orang di antaranya, adalah pendukung kemerdekaan yang dibunuh oleh anggota milisi atau anggota pasukan keamanan. (Lihat ringkasan kabupaten: Dili.)

Periode setelah pemungutan suara (30 Agustus hingga akhir Oktober):

Pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat dan luas terjadi segera setelah pemungutan suara. Antara 30 Agustus 1999 hingga keberangkatan terakhir TNI pada akhir Oktober, diperkirakan 900 orang dibunuh di luar hukum, dan sekitar 400.000 orang, atau hampir separuh dari seluruh penduduk meninggalkan rumahnya akibat paksaan yang luarbiasa. Dari jumlah itu setidaknya 250.000 melarikan diri atau dipindahkan secara paksa ke Timor Barat, dan bagian-bagian lain Indonesia, sementara sisanya berlindung di bukit-bukit dan hutan-hutan.

Salvo pembuka terjadi pada pukul lima sore pada hari pemungutan suara, ketika sekelompok milisi dan prajurit TNI menyerang sebuah tempat pemungutan suara di Desa Boboe Leten, di Kabupaten Ermera. Dua orang Timor-Leste petugas lokal UNAMET dibunuh dalam serangan tersebut, dan seorang lainnya terluka. Penyelidikan PBB kemudian mengungkapkan bahwa penyerangan tersebut telah direncanakan lebih dahulu dengan sepengetahuan komandan Komando Rayon Militer (Koramil), dan bahwa para prajurit TNI ambil bagian dalam serangan itu. (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan staf UNAMET di Boboe Leten.)

Pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia juga dilaporkan terjadi di berbagai pusat kegiatan pro-otonomi yang terkenal. Pada 2 September, misalnya, pasukan-pasukan milisi dan prajurit TNI di kota Maliana mulai mengancam dan menyerang orang-orang yang diketahui sebagai pendukung kemerdekaan, serta menjarah dan membakari rumah-rumah mereka. Aktivitas yang sama juga dilaporkan terjadi di Covalima dan Ermera.

Namun di sebagian besar wilayah Timor-Leste, kekerasan belum sungguh-sungguh dimulai sampai 4 September, ketika hasil pemungutan suara secara resmi diumumkan. Pengumuman tersebut dilakukan pada pagi hari waktu setempat, dan siang harinya para milisi, prajurit TNI, dan petugas Polri turun ke jalan-jalan di kota dan desa di seluruh Timor-Leste, menembak-nembakkan senjata mereka, menyerang para pendukung kemerdekaan, serta membakari rumah dan bangunan-bangunan umum.

Walaupun telah berjanji untuk tetap tinggal di Timor-Leste setelah pemungutan suara, UNAMET menjadi tidak berdaya menghadapi kekerasan yang meningkat. Pada 7 September, semua staf UNAMET telah dievakuasi ke Dili. Mereka berlindung di kantor pusat UNAMET di Dili. Di sana mereka bergabung dengan ratusan penduduk lokal yang telah meninggalkan rumah mereka untuk mendapatkan keamanan di kompleks ini. Pada 8 September kurang lebih 500 staf PBB dan 1.500 orang pengungsi dalam negeri berada di dalam kompleks. Sementara itu, gerombolan-gerombolan milisi bersenjata melancarkan pengepungan terhadap kompleks, mencegah staf UNAMET dan pengungsi meninggalkan tempat tersebut. Dengan staf UNAMET terkepung di markas besarnya sendiri, dan nyaris semua pengamat dan wartawan telah meninggalkan Timor-Leste, kekerasan yang sesungguhnya dimulai.

Dengan latar belakang inilah TNI mengambil dua prakarsa yang seolah-olah bertujuan untuk pemulihan ketertiban. Pada 4 September, TNI mengambil alih tanggung jawab keamanan dan ketertiban dari tangan Polri, di bawah pengawasan satu komando khusus yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Adam Damiri, dengan nama 'Komando Operasi TNI Nusa Tenggara' (Ko-Ops TNI Nusra). Selanjutnya, pada 6 September Presiden Habibie menyatakan keadaan darurat militer di Timor-Leste, yang mulai diberlakukan pada pukul 00.00 tanggal 7 September. Pihak berwenang militer Indonesia menjamin bahwa tindakan ini akan dapat mengendalikan kekerasan. Namun dalam kenyataannya, justru selama periode ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan.

Pemahaman mengenai polanya dapat dilihat secara sekilas dengan memperhatikan sejumlah kecil pelanggaran utama yang terjadi segera pada periode setelah pemungutan suara, dan setelah militer mengambil alih kendali.

- Pada 6 September, pasukan TNI dan Brimob membantu kelompok-kelompok milisi ketika mereka mengeksekusi banyak orang, termasuk tiga orang pastor, yang berlindung di Gereja Suai. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Gereja Suai.)
- Pada hari yang sama, para prajurit TNI dan polisi bersama dengan milisi secara paksa mengevakuasi ribuan orang yang mengungsi di tempat kediaman Uskup Belo, dan di kantor Palang Merah Internasional serta di Susteran Canossiana yang berada di dekatnya. (Lihat studi kasus: Pemandahan paksa dan pembunuhan pengungsi di Dili.)
- Dua hari kemudian, pada 8 September, para prajurit TNI dan milisi membantai sebanyak 14 orang di antara ratusan orang yang mengungsi di kantor Polri di kota Maliana. Tiga belas orang lainnya yang melarikan diri dari pembantaian ini, diburu, ditangkap, dan dibunuh pada hari berikutnya. (Lihat studi kasus: Pembantaian di kantor polisi Maliana.)
- Sedikitnya 21 orang, termasuk seorang wartawan asing, dibunuh pada September, oleh unsur-unsur Batalion 745 TNI, ketika batalion ini ditarik dari markasnya di Los Palos melalui Baucau dan Dili, dalam perjalanan ke Timor Barat. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)

- Di daerah kantong Oecussi, hampir seratus orang dibantai oleh para prajurit TNI dan milisi dalam dua insiden terpisah pada September dan Oktober, sehingga membuat jumlah orang yang dibunuh di distrik itu menjadi 170 orang. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Passabe dan Maquelab.)

Insiden-insiden tersebut, dan banyak insiden lainnya, merupakan latar belakang kunci bagi pola pengancaman, intimidasi, dan teror sistematis yang, menurut perhitungan yang konservatif, mengarah pada pemindahan paksa setengah dari seluruh jumlah penduduk Timor-Leste, dalam jangka waktu dua hingga tiga minggu. Bisa dikatakan bahwa pembunuhan massal tersebut merupakan bagian pokok dari sebuah tindakan teror yang disengaja. Pembunuhan-pembunuhan itu kurang-lebih memastikan bahwa semua orang harus meninggalkan rumahnya, bahkan pergi ke pengasingan, untuk menghindari nasib yang sama.

Korban

Korban-korban pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 sebagian besar adalah para pendukung atau yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan, berikut kerabat dekatnya. Sebagian dari mereka yang dijadikan sasaran adalah pemimpin politik terkenal atau warga masyarakat yang terkemuka, tetapi sebagian besar adalah laki-laki dan perempuan biasa, yang kebanyakan petani atau nelayan. Kelompok-kelompok utama korban prokemerdekaan tersebut mencakup: para pemimpin CNRT; pejabat lokal; orang yang dianggap sebagai pengkhianat; penduduk desa di wilayah basis prokemerdekaan; para rohaniwan Katolik; mahasiswa dan pemuda, staf lokal UNAMET; perempuan dewasa dan muda, serta anak-anak kecil.

Orang-orang non-Timor—termasuk staf UNAMET, jurnalis, dan pengamat—juga menjadi sasaran ancaman, intimidasi, dan pelecehan, dan sebagian mengalami serangan fisik dan terluka. Namun, patut dicatat bahwa staf internasional dan pengamat sangat jarang menjadi sasaran kekerasan yang mematikan, dan hanya dua orang asing yang terbunuh selama tahun itu.^{*} Sebagaimana yang dibahas di bawah, pola tersebut tampaknya merupakan bagian dari strategi yang sengaja dipersiapkan oleh para pejabat Indonesia dan bukannya sekadar persoalan nasib baik.

Sejumlah kecil korban kekerasan adalah anggota kelompok pro-otonomi, atau yang diketahui sebagai pendukung Indonesia. Jumlah keseluruhan pendukung pro-otonomi yang terbunuh pada 1999 tidak lebih daripada 20 orang, dari seluruh korban meninggal yang berjumlah sedikitnya 1.200 orang. Ketimpangan ini membantah klaim yang dibuat oleh penguasa Indonesia bahwa kekuatan pro-otonomi adalah korban utama dari kekerasan, dan bahwa mobilisasi milisi adalah persoalan pertahanan diri.

* Dua korban itu adalah pastor tua berkebangsaan Jerman, Carolus Albrecht, dan seorang wartawan Belanda, Sander Thoenes. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)

Kalau dilihat secara keseluruhan, pola-pola kekerasan tersebut menjelaskan bahwa kekerasan pada 1999 tidak terjadi secara acak, melainkan terarah, dan dirancang untuk mencapai tujuan politik tertentu: kemenangan pilihan pro-otonomi dalam Konsultasi Rakyat.

Pemimpin CNRT:

Para pemimpin CNRT amat dikenal di antara para korban pelanggaran hak asasi manusia pada 1999, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara. Dalam masa pra-UNAMET, beberapa pemimpin ini dibunuh tanpa proses hukum, dan banyak lainnya terpaksa mencari perlindungan di kantor-kantor polisi atau melarikan diri ke gunung-gunung atau kota-kota lain. Situasi menjadi lebih berbahaya dalam periode setelah pemungutan suara. Di setiap kabupaten di Timor-Leste, milisi dan prajurit TNI membidik para pemimpin CNRT untuk dieksekusi.*

Pejabat lokal:

Yang juga menjadi sasaran, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara, adalah para pejabat lokal—meliputi para kepala desa, camat, dan pegawai negeri sipil—yang tidak cukup memperlihatkan semangat mendukung pilihan pro-otonomi, atau yang samasekali menentangnya. Pejabat lokal semacam itu mendapatkan tekanan keras tidak hanya dari para milisi tetapi juga dari para prajurit dan perwira TNI, serta dari para pejabat sipil. Bentuk-bentuk tekanannya termasuk penghinaan di depan umum pada saat pertemuan, ancaman fisik, serangan terhadap anggota keluarga, pembakaran dan penjarahan rumah korban, dan dalam beberapa kasus, berupa pembunuhan.

Orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat:

Kelompok penting dari para pendukung kemerdekaan yang menjadi sasaran pada 1999 adalah orang-orang yang pernah dianggap menjadi pendukung kekuasaan Indonesia. Tokoh-tokoh semacam itu dianggap pengkhianat oleh pejabat-pejabat Indonesia dan orang Timor pro-Indonesia, dan menjadi sasaran serangan atau pembunuhan.

Salah satu contoh dari pola tersebut adalah pembunuhan terhadap *liurai* Los Palos, Verissimo Dias Quintas, pada 27 Agustus 1999. Sekalipun ia menampilkan dirinya kepada Indonesia sebagai pendukung kekuasaan Indonesia, tetapi rupanya ia secara tidak terbuka menjadi pendukung kemerdekaan, dan pada 1999 menyediakan

.....
* Tidak ada keraguan bahwa para pemimpin CNRT sengaja dijadikan sasaran. Di samping bukti tidak langsung yang begitu banyak yang diuraikan dalam laporan ini, juga ada beberapa bukti dokumenter mengenai hal tersebut. Misalnya, dalam satu perintah tertanggal 3 September 1999, Komandan Aitarak, Eurico Guterres memerintahkan kepada wakilnya, Inacio de Jesus, dan sepuluh anggota milisi lainnya untuk berkoordinasi dengan para anggota Aitarak dan BMP untuk memeriksa orang-orang yang berusaha meninggalkan Timor-Leste. Perintah itu menyatakan secara eksplisit bahwa "Elit-elit Politik dan Kelompok Anti Integrasi (pengurus CNRT-Falintil) supaya ditahan dan diamankan sambil menunggu perintah dari Komandan Komando Pasukan Aitarak." Lihat: Komandan, Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres). Perintah No. 139/SPT/MK-AT/IX/1999, [3] September 1999 (Koleksi SCU, Doc #27).

rumahnya untuk dijadikan kantor CNRT. Pembunuhan terhadap dirinya, yang dilakukan oleh milisi dan para anggota BRTT, di bawah arahan perwira Kopassus dan Bupati, secara luas dianggap sebagai imbalan bagi “pengkhianatan”-nya. Demikian juga dengan serangan kekerasan terhadap rumah Manuel Carrascalão pada 17 April 1999 yang mengakibatkan kematian sedikitnya 12 orang, tampaknya dimotivasi oleh kebencian terhadap keluarga Carrascalão, yang melakukan perubahan sikap politik dalam tahun-tahun terakhir kekuasaan Indonesia.

Penduduk biasa:

Sementara sebagian korban pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 adalah tokoh lokal maupun nasional yang terkemuka, sebagian besarnya adalah orang biasa yang hidup di desa-desa yang dianggap sebagai benteng prokemerdekaan. Sebagian dari mereka dicurigai sebagai anggota aktif gerakan perlawanan, sementara yang lain dituduh memasok gerakan perlawanan dengan bahan makanan. Sebagian yang lain dijadikan sasaran sebagai ganti untuk para anggota keluarga yang telah melarikan diri.

Apapun alasannya, sebagian besar dari orang-orang ini adalah petani dan nelayan, yang rumahnya dijarah dan dibumihanguskan, dan yang dipaksa melarikan diri ke gunung-gunung atau ke kota-kota yang berdekatan, sebelum maupun setelah pemungutan suara. Susah dicapai melalui jalanan umum, tidak ada saluran telepon, dan hanya sedikit pengunjung dari luar, desa-desa tersebut rentan terhadap perusakan yang dilakukan oleh para prajurit TNI dan kelompok-kelompok milisi. Pembantaian terhadap hampir 100 orang di beberapa desa di Oecussi pada pertengahan September 1999 merupakan salah satu contoh kasusnya. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Passabe dan Maquelab.)

Para rohaniwan:

Salah satu aspek yang paling mengejutkan dari kekerasan yang dilakukan oleh kekuatan pro-otonomi adalah dengan menjadikan para pastor Katolik dan tempat-tempat ibadah secara sengaja sebagai sasaran. Pembantaian di gereja-gereja di Liquiçá dan Suai, masing-masing pada April dan September, serangan terhadap tempat tinggal Uskup Belo pada September, dan pembunuhan dengan cara eksekusi terhadap sekelompok rohaniwan di sepanjang jalan ke Baucau pada 25 September, tampak sudah diperhitungkan untuk meneror penduduk yang 80% beragama Katolik Roma.

Beberapa pengamat berpendapat bahwa pengarahannya pada rohaniwan Katolik dan tempat-tempat ibadah mengandung arti adanya motif keagamaan di balik kekerasan, yang mungkin didorong oleh kaum Muslim Indonesia. Namun bukti yang tersedia tidak mendukung pendapat tersebut. Sebetulnya, serangan terhadap tokoh-tokoh agama dan umatnya berakar pada anggapan bahwa Gereja telah mendukung, dan bahkan mendorong, perjuangan kemerdekaan. Kekerasan terhadap para pemimpin dan umat gereja dimotivasi, atau setidaknya dijustifikasi, lebih oleh alasan politik daripada alasan keagamaan.

Mahasiswa dan pemuda:

Mahasiswa dan pemuda adalah salah satu di antara kelompok yang secara sengaja dijadikan sasaran oleh para milisi dan pasukan keamanan Indonesia. Seperti sebagian tokoh gereja Katolik, pemuda dan mahasiswa selama beberapa tahun telah dikenal sebagai penggerak utama aktivitas prokemerdekaan. Tepat untuk mengatakan bahwa kaum muda berada di garis depan perjuangan kemerdekaan, setidaknya sejak awal dasawarsa 1990-an, dan banyak yang telah meninggal demi perjuangan itu. Para pejabat Indonesia dan orang-orang Timor pro-Indonesia menyadari ancaman dari para mahasiswa dan pemuda ini, dan bertekad menggagalkan perjuangan tersebut.

Anggota-anggota dari berbagai organisasi mahasiswa prokemerdekaan amat rentan menghadapi kekerasan ini. Satu kelompok yang disebutkan pada 1999 adalah Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur (DSMPTT), yang mulai menggerakkan kegiatan informasi publik dengan penuh semangat pada Agustus 1998. Banyak dari anggota DSMPTT yang diancam, dipukuli, dan dibunuh pada 1999. (Lihat studi kasus: Pembunuhan dua mahasiswa di Hera.)

Staf lokal UNAMET:

Orang-orang Timor yang bekerja dengan UNAMET juga dipilih menjadi sasaran serangan. Setidaknya 14 orang staf lokal UNAMET dibunuh pada 1999, dan semuanya dibunuh pada periode setelah pemungutan suara. Di antara mereka yang dibunuh adalah dua orang laki-laki, yang telah disebutkan, ditikam hingga mati di akhir pemungutan suara pada 30 Agustus, di Boboe Leten, Ermera. (Lihat studi kasus: Pembunuhan terhadap anggota staf UNAMET di Boboe Leten). Ketika kelompok-kelompok milisi mulai mengamuk di Maliana pada 2 September 1999, dua orang staf lokal UNAMET termasuk yang menjadi korban pertama di sana.

Staf lokal UNAMET kadang-kadang dijadikan sasaran karena memang mendukung atau dianggap mendukung kemerdekaan. Tampaknya inilah salah satu alasan serangan terhadap Ana Lemos, seorang staf UNAMET yang dipukuli, diperkosa, dan kemudian dibunuh di Ermera pada hari-hari setelah pemungutan suara. (Lihat studi kasus: Pemeriksaan dan pembunuhan Ana Lemos.) Mereka juga dipilih oleh karena antipati umum terhadap UNAMET yang berkembang di antara para pendukung Indonesia, yang telah disiram oleh pernyataan-pernyataan tanpa bukti, termasuk beberapa dari sumber resmi, tentang kecenderungan dan sikap tidak adil UNAMET mendukung kemerdekaan. Dengan kata lain, pembunuhan-pembunuhan ini bukanlah tindakan yang sembarangan tetapi pembunuhan dengan motivasi politik.

Kaum perempuan dewasa dan muda:

Di antara para korban pelanggaran berat hak asasi manusia pada 1999, kaum perempuan dewasa dan anak-anak perempuan Timor-Leste menempati posisi khusus. Bagi kaum perempuan dewasa dan anak-anak perempuan Timor-Leste, di samping mengalami serangkaian kekerasan seperti yang dialami oleh kaum

laki-laki—termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan pengungsian paksa—mereka juga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia berbasis gender, yang mencakup pemerkosaan dan perbudakan seksual.

Suasana politik pada 1999 membuat kaum perempuan khususnya rentan terhadap serangan-serangan semacam itu. Ketika kegiatan kekerasan terhadap kemerdekaan meningkat cepat, banyak laki-laki melarikan diri ke gunung-gunung atau ke kota-kota utama, meninggalkan anak dan istri mereka di rumah untuk mengurus ladang dan hewan ternak. Oleh karenanya, sebagaimana dinyatakan oleh organisasi hak perempuan Fokupers, “kaum perempuan dan anak-anak mereka menjadi sasaran pengganti intimidasi dan teror.” Perempuan yang suaminya diyakini menjadi pejuang Falintil, atau yang dianggap bersimpati prokemerdekaan, secara khusus rentan diserang. (Lihat studi kasus: Penahan sewenang-wenang dan pemerkosaan di Lolotoe; dan pemerkosaan dan pembunuhan Ana Lemos.)

Anak-anak:

Walaupun anak-anak tampak tidak dijadikan sasaran khusus pada 1999, jumlah anak-anak yang mengalami pelanggaran berat hak asasi manusia cukup berarti. Setidaknya selusin anak dibunuh dalam kekerasan politik selama tahun itu. Mereka mencakup seorang anak kecil dan dua orang remaja yang dibunuh dalam pembantaian di Gereja Suai pada 6 September, dan lima anak dari satu keluarga yang dibunuh, bersama dengan ibunya, setelah diculik oleh anggota milisi pada September 1999. Ibu anak-anak itu, Georgina Tilman, dikenal karena pandangannya yang prokemerdekaan. (Lihat ringkasan kabupaten: Ermera.)

Anak-anak juga mengalami gangguan mental dan luka-luka fisik yang berat ketika mereka ditangkap dan menjadi saksi atas kekerasan tanpa pandang bulu, termasuk serangan terhadap anggota keluarga mereka. Sejumlah anak menyaksikan saudara-saudaranya dipukuli atau dipenggal hingga mati. Anak-anak juga menjadi bagian dari korban kekerasan seksual pada 1999. Dari kasus-kasus kekerasan seksual yang didokumentasikan oleh Fokupers, tiga di antaranya adalah pemerkosaan anak di bawah umur, dan lima kasus adalah serangan seksual terhadap anak-anak. Lima lainnya adalah kasus anak-anak yang dipaksa menyaksikan pemerkosaan.[†]

Staf internasional dan wartawan internasional:

Satu ciri yang mencolok dari pola pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 adalah bahwa, meskipun terjadi kekacauan dan milisi yang mengamuk—dan walaupun beberapa dari mereka berada sangat dekat dengan peristiwa kekerasan—tidak satupun anggota staf internasional PBB dibunuh. Meskipun sebagian orang menganggap ini sekadar kebetulan, namun hal ini merupakan petunjuk lebih jauh bahwa tindak kekerasan disusun dengan hati-hati, sangat mungkin oleh mereka

* Fokupers, “Progress Report 1 – Gender-based Human Rights Abuses,” Dili, Juni 2000, halaman 7.

† Fokupers, “Progress Report 1 – Gender-based Human Rights Abuses,” Dili, Juni 2000, halaman 5.

yang berada di Jakarta yang menyadari bahwa kekerasan terhadap orang asing bisa menimbulkan dampak internasional.

Tampaknya satu bagian pokok dari rencana tersebut adalah untuk menciptakan kesan terjadinya anarki yang dirancang untuk menakut-nakuti—tetapi tidak untuk membunuh—staf UNAMET dan pengamat internasional, serta para wartawan. Pendekatan itu menjadi nyata dalam serangan terhadap UNAMET pada akhir Juni dan awal Juli, dan pada 30 Agustus di Atsabe yang mengakibatkan dua staf lokal UNAMET meninggal, tetapi tidak ada staf internasional yang dibunuh atau terluka sekalipun.

Satu yang hampir menjadi perkecualian terhadap rancangan umum ini muncul dalam kasus evakuasi UNAMET dari Liquiçá pada 4 September 1999. Dalam kasus tersebut, sebuah konvoi UNAMET disergap dan ditembak oleh milisi, Polri, dan TNI ketika konvoi itu meninggalkan kampnya. Seorang polisi sipil asal Amerika Serikat tertembak dan terluka parah, dan beberapa kendaraan penuh lubang peluru, namun tidak ada korban meninggal. Perkecualian kedua terjadi di Baucau pada 7 September ketika Brimob menembak secara langsung ke kamp UNAMET, tampaknya dengan tujuan untuk membunuh atau melukai staf PBB. Dalam kasus ini juga, tidak ada korban terluka.

Walaupun ada perkecualian seperti itu, jelas ada strategi meneror tetapi tidak untuk membunuh orang asing. Strategi itu tampaknya berdasar atas kesadaran para pejabat—pada tingkat tinggi dan kemungkinan besar di Jakarta—bahwa kematian seorang asing sangat mungkin akan membangkitkan tanggapan internasional yang kuat dan tidak diharapkan. Sebaliknya, penciptaan suatu kesan kekacauan, dan bahkan kematian beberapa orang Timor-Leste, akan memberikan dalih yang masuk akal untuk memindahkan semua pengamat internasional dari wilayah perdesaan, dan meminta tentara Indonesia untuk “memulihkan keamanan”.

Untuk suatu waktu, di awal September 1999, strategi itu tampak berhasil. Ketika sebagian besar pengamat internasional meninggalkan Timor-Leste, dan sisanya bertahan di kompleks PBB di Dili, para petugas berwenang Indonesia dan milisi bebas membalas dendamnya terhadap orang-orang Timor-Leste yang telah memilih kemerdekaan. Menurut semua kesaksian, saat itulah kekerasan yang paling buruk berlangsung tanpa kendali.

Tokoh pro-otonomi dan milisi:

Korban kekerasan politik pada 1999 juga mencakup sejumlah tokoh pro-otonomi yang terkemuka dan para anggota kelompok milisi. Sebagian ditahan, dipukuli, dan diinterogasi sebelum dibebaskan, sementara yang lain dibunuh. Para pejabat Indonesia dan pemimpin pro-otonomi menyatakan bahwa sejumlah besar pendukung mereka terbunuh pada 1999. Namun, ada kurang daripada 20 pembunuhan terhadap para pendukung mereka yang dapat dipastikan.

Pembunuhan yang terjadi sering membangkitkan kekerasan pembalasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pro-otonomi dan pasukan tentara Indonesia, yang dengan demikian menghasilkan lingkaran kekerasan. Misalnya, pembunuhan

terhadap seorang pengurus FPKD dan pegawai negeri sipil, Manuel Gama, pada April 1999 mendorong dilakukannya tindakan penghantaman besar oleh tentara Indonesia yang mengakibatkan terjadinya sejumlah pembunuhan di Cailaco, Bobonaro. (Lihat studi kasus: Pembunuhan di Cailaco.) Demikian juga di Manatuto, pembunuhan terhadap seorang pemimpin kelompok milisi Morok, Filomeno Lopez da Cruz, pada April mengakibatkan terjadinya pembunuhan pembalasan yang dilakukan oleh kekuatan pro-Indonesia. (Lihat ringkasan kabupaten: Manatuto.) Sama halnya dengan pembunuhan terhadap dua orang milisi Ablai di Dili pada April yang kemudian mendorong adanya gelombang kekerasan di kampung halaman mereka di Manufahi pada bulan itu juga, dan dalam kejadian itu setidaknya lima orang dibunuh. (Lihat ringkasan kabupaten: Manufahi.)

Pelaku

Pelaku langsung pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 sebagian besar adalah anggota milisi, namun para prajurit dan perwira TNI hampir selalu terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anggota-anggota Polri dan Brimob jarang diidentifikasi sebagai pelaku langsung, tetapi mereka hampir selalu disebutkan tidak mengambil tindakan untuk mencegah, menghentikan, atau menginvestigasi pelanggaran berat hak asasi manusia. Para prajurit Falintil, dan kemungkinan para anggota kelompok prokemerdakaan yang lain, bertanggung jawab atas penganiayaan dan pembunuhan terhadap sejumlah kecil tokoh pro-otonomi dan anggota milisi.

Di luar pola umum ini, bukti yang ada menunjukkan bahwa beberapa kelompok milisi, kesatuan TNI, dan kesatuan Polri tertentu lebih umum terlibat dalam melakukan secara langsung pelanggaran hak asasi manusia dibandingkan kelompok-kelompok milisi dan kesatuan-kesatuan dalam TNI serta Polri lainnya.

Milisi:

Kelompok milisi yang paling buruk, dari segi kekejaman dan seringnya kekerasan yang mereka lakukan, adalah Dadurus Merah Putih dan Halilintar di Bobonaro, Sakunar di Oecussi, Aitarak di Dili, Besi Merah Putih di Liquiçá, Darah Integrasi di Ermera, Mahidi di Ainaro, dan Laksaur di Covalima. Yang kurang begitu kelihatan, tetapi meskipun demikian menjadi pelaku pelanggaran berat, adalah Tim Alfa di Lautém, Makikit di Viqueque, Saka dan Sera di Baucau, Ablai di Manufahi, serta Morok dan Mahadomi di Manatuto.

Militer:

Keterlibatan TNI dalam pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 terjadi dalam empat bentuk dasar. Pertama, TNI membantu merekrut, melatih, membiayai, dan mempersenjatai kelompok-kelompok milisi yang melakukan pelanggaran. Kedua, TNI mengarahkan dan mengambil bagian dalam operasi bersama dengan kelompok-kelompok milisi, selama terjadinya berbagai pelanggaran. Ketiga, pasukan-pasukan TNI mendukung pelaksanaan pelanggaran dengan secara sengaja tidak melakukan

apa-apa untuk mencegah atau tidak menghentikan kekerasan yang terencana atau berkelanjutan yang dilakukan oleh milisi. Terakhir, dalam sejumlah kasus penting, pasukan TNI secara langsung melakukan tindak kekerasan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat.

Satu unit militer yang paling berbahaya adalah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan satuan tugas intelijennya, yang dikenal sebagai SGI (Satuan Tugas Intelijen). Walaupun relatif sedikit anggotanya, para perwira dan mata-mata Kopassus dan SGI sangat penting perannya dalam merancang dan melaksanakan beberapa serangan dan tindak kekerasan yang paling brutal dan mematikan di seluruh wilayah Timor-Leste pada 1999. Kesatuan elite TNI lainnya yang ditugaskan di Timor-Leste, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), agaknya berperan penting, walaupun kurang terlihat, dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Kesatuan reguler teritorial TNI yang paling berbahaya di Timor-Leste adalah yang ditempatkan pada Kodim 1636 di Bobonaro, Kodim 1635 di Covalima, Kodim 1638 di Liquiçá, Kodim 1633 di Ainaro, dan Kodim 1639 di Oecussi. Yang juga jelas melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, terutama dalam periode setelah pemungutan suara, adalah Batalion 745 TNI yang berbasis di Los Palos. Sebagaimana dicatat di atas, unsur-unsur dari batalion ini bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap sekitar 21 orang termasuk seorang wartawan Belanda Sander Thoenes, ketika mereka meninggalkan Los Palos menuju Timor Barat pada September 1999. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)

Polisi:

Unit Polri yang paling sering terlibat dalam pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya adalah unit paramiliter Brigade Mobil (Brimob), yang ditugaskan dalam jumlah besar di seluruh wilayah Timor-Leste pada 1999. Pasukan-pasukan Brimob secara langsung bertanggung jawab, misalnya, atas pembunuhan di luar hukum terhadap seorang pendukung prokemerdekaan yang tidak bersenjata di Dili pada 26 Agustus. Pemuda tersebut saat itu mendesak prajurit-prajurit Brimob untuk bertindak terhadap anggota-anggota milisi bersenjata yang sedang menyerang para pemuda prokemerdekaan yang tidak bersenjata. Sebagai tanggapannya, para prajurit Brimob malah mengangkat senjata otomatisnya dan menembak pemuda itu hingga mati. (Lihat ringkasan kabupaten: Dili.)

Namun perlu dicatat bahwa berbeda dengan pola-pola lain perilaku Polri yang diamati, pelaksanaan langsung tindak kekerasan oleh para prajurit Brimob tampak agak sporadis. Sehingga ada kemungkinan bahwa insiden semacam itu bukanlah bagian dari rencana keseluruhan, namun merupakan produk dari suatu kecenderungan kelembagaan untuk menggunakan kekuatan yang mematikan. Dilengkapi dengan senjata otomatis berkekuatan tinggi (S-1), dan mendapatkan pelatihan seperti militer, Brimob sejak dulu (dan sekarang masih) pada dasarnya adalah suatu pasukan paramiliter bukan pasukan kepolisian, dan karenanya mereka memiliki banyak budaya kelembagaan yang sama dengan pasukan reguler dan tempur TNI.

Falintil:

Pada umumnya, pasukan Falintil melakukan pengendalian diri menghadapi serangan kekuatan pro-Indonesia. Namun, terdapat perkecualian. Di akhir 1998, dan sekali lagi pada April 1999, unit-unit Falintil di berbagai wilayah Timor-Leste memulai operasi-operasi yang di dalamnya anggota-anggota milisi pro-Indonesia, prajurit tentara, dan penduduk sipil ditahan, dipukuli atau dibunuh. Serangan dan pembunuhan semacam itu diketahui terjadi di Manufahi, Ermera, Manatuto, Bobonaro, Liquiçá, dan Dili. Dalam periode setelah pemungutan suara, badan keamanan Falintil, yang dikenal sebagai *Forças Popular* dan *Segurança*, melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam sejumlah kasus, orang-orang yang diketahui atau dicurigai sebagai anggota milisi pro-Indonesia ditahan dan disiksa ketika sedang diinterogasi.

Kesimpulannya, kejahatan penting yang terjadi di Timor-Leste pada 1999 mencakup pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan penganiayaan, kekerasan seksual, pemindahan penduduk secara paksa, dan penghancuran harta-benda. Tindakan-tindakan ini melanggar berbagai macam hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional, meliputi hak untuk hidup, hak atas keamanan diri pribadi, hak atas integritas fisik, kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul, dan hak untuk memiliki harta-benda.

Korban pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 sebagian besar adalah para pendukung dan yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan, serta kerabat dekat mereka. Kelompok-kelompok utama korban (prokemerdekaan) mencakup: para pemimpin CNRT, pejabat tingkat lokal, orang-orang yang dianggap pengkhianat, penduduk desa di wilayah-wilayah basis prokemerdekaan, rohaniwan Katolik, mahasiswa dan pemuda, staf lokal UNAMET, perempuan dewasa dan muda, serta anak-anak kecil. Sejumlah kecil korban kekerasan adalah anggota kelompok-kelompok pro-Indonesia.

Orang-orang non-Timor-Leste—termasuk di dalamnya para staf internasional UNAMET, wartawan, dan pengamat—juga menjadi sasaran ancaman, intimidasi, dan pelecehan, dan beberapa diserang secara fisik dan terluka. Namun patut dicatat bahwa para pengamat dan staf internasional sangat jarang menjadi sasaran kekerasan yang mematikan, dan hanya dua orang asing yang dibunuh selama 1999. Seperti yang dibahas dalam Bab 4, pola itu tampaknya merupakan bagian dari satu strategi yang dipersiapkan secara sengaja oleh pihak berwenang Indonesia.

Pelaku langsung pelanggaran hak asasi manusia pada 1999 secara umum adalah para anggota dari sekian banyak kelompok milisi, namun para prajurit dan perwira TNI juga terlibat dalam kebanyakan kasus. Para perwira TNI, terutama dari intelijen militer dan unit-unit Kopassus, memimpin atau mengarahkan sebagian besar kelompok milisi, sementara sejumlah prajurit dan perwira TNI secara langsung melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Anggota-anggota Polri dan Brigade Mobil juga diidentifikasi sebagai pelaku langsung, walau tidak sesering para anggota TNI. Di samping itu, Polri jarang bertindak mencegah, menghentikan,

atau menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia. Pelaku utama kekerasan terhadap tokoh-tokoh pro-Indonesia adalah para prajurit Falintil.

Pola-pola ini menghapus keraguan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di Timor-Leste pada 1999 dilaksanakan dalam skala yang luas dan sistematis, dalam konteks suatu serangan yang sengaja terhadap bagian-bagian tertentu dari penduduk Timor-Leste. Karenanya, kita bisa menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap umat manusia, sebagaimana yang didefinisikan di dalam Statuta Roma dan perjanjian-perjanjian serta instrumen-instrumen internasional yang terkait.

Pola dan variasi

Pengamatan lebih dekat terhadap kekerasan 1999 ini mengungkap lebih jauh pola-pola dan variasi dari sifat serta penyebarannya. Hal-hal ini mencakup: variasi sistematis intensitas kekerasan sepanjang waktu; satu pola ketakmampuan rutin Polri untuk mengambil tindakan efektif dalam menghadapi tindak kekerasan; kesamaan yang jelas dalam *modus operandi* kekuatan milisi; dan satu variasi penting dalam persebaran kekerasan secara geografis. Pola dan variasi ini memberikan sebagian dari bukti yang paling kuat bahwa kekerasan di tahun 1999 bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontan, tetapi sesuatu yang sistematis dan diatur oleh pihak berwenang Indonesia.

Variasi sementara – penutupan keran

Sebagaimana yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, dari segi parahnya pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste, kekerasan 1999 dapat dibagi ke dalam tiga periode: (i) periode pra-UNAMET, dari Januari hingga akhir Mei; (ii) periode UNAMET, dari 1 Juni hingga 30 Agustus; dan (iii) periode setelah pemungutan suara, dari 30 Agustus hingga akhir Oktober. Secara umum dapat dikatakan, pelanggaran hak asasi manusia paling sering dan paling berat terjadi pada periode pertama dan ketiga, dan tak seserius itu pada periode kedua.

Pola itu bukanlah kebetulan dan tidak dapat dijelaskan dengan merujuk kepada kepentingan-kepentingan atau perilaku individu anggota milisi atau “oknum” prajurit TNI. Sebaliknya, karena sifat sistematis dari variasi kekerasan yang berkembang di seluruh Timor-Leste, pola itu hanya dapat dijelaskan secara masuk akal sebagai produk keputusan politik, yang setidaknya diambil di tingkat provinsi, dan kemungkinan di tingkat yang lebih tinggi. Lebih tepatnya, pola itu tampak mencerminkan suatu keputusan melakukan pengendalian terhadap milisi dan tentara selama periode kehadiran internasional dalam jumlah yang besar. Baik sebelum maupun setelah periode pengawasan internasional, TNI dan kelompok-kelompok milisi secara bersama-sama melancarkan serangan kekerasan.

Bahkan hal yang mungkin lebih mengungkap perencanaan tingkat tinggi adalah pola variasi dalam setiap periode luas tersebut. Suatu pengkajian yang seksama menunjukkan bahwa pasang-surut kekerasan tepat sejalan dengan kepentingan politik internasional Indonesia. Lebih jauh lagi, dokumen-dokumen rahasia dari 1999 menyingkirkan keraguan bahwa para komandan TNI di Timor-Leste berusaha menjalankan kendali langsung atas tindakan kekerasan milisi, yang secara efektif menggerakkan atau menghentikan kekerasan sesuai dengan tujuan politik yang lebih luas.

Pola tersebut mulai mengemuka akhir Januari 1999, di puncak gelombang pertama kekerasan milisi dan tidak lama sebelum kunjungan satu delegasi PBB ke Timor-Leste pada 9 Februari 1999. Untuk mengantisipasi kunjungan tersebut, pihak berwenang militer Indonesia—dan khususnya Danrem Kol. Tono Suratman—mengambil langkah-langkah yang seksama untuk memastikan bahwa kekerasan milisi akan berhenti, atau tidak akan terlihat oleh delegasi PBB.

Sejumlah dokumen rahasia TNI merekam langkah-langkah tersebut. Pertama adalah sebuah perintah dari Kol. Tono Suratman tertanggal 28 Januari 1999, kepada ke-13 Dandim di Timor-Leste. Perintah itu dibuka dengan menyebutkan: “rencana kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia PBB ke Timtim tanggal 9 Februari 1999” dan “beberapa kasus yang terjadi di wilayah Timtim yang melibatkan Wanra [yaitu milisi] yang mengakibatkan korban jiwa.” Surat perintah itu selanjutnya berbunyi:

“Sehubungan dengan ref di atas, kepada tersebut alamat agar melaksanakan penarikan senjata yang dipegang oleh anggota Wanra atau Ratih [yaitu milisi] selama tidak melaksanakan tugas khusus atau operasi tempur di wilayah Kodim masing-masing.”

Dokumen ini mengungkapkan beberapa keterangan. Pertama, sebagaimana yang dibahas dalam Bab 7, dokumen itu menegaskan bahwa TNI memang membagikan senjata kepada milisi-milisi, dan bahwa milisi-milisi bersenjata secara teratur ditugaskan oleh TNI untuk melaksanakan operasi-operasi tempur. Kedua, dokumen itu secara meyakinkan menunjukkan bahwa pihak berwenang militer Indonesia berada dalam posisi mengendalikan arus kekerasan milisi, dan melakukannya sejalan dengan tujuan politik yang lebih luas. Dalam hal ini, tujuannya adalah menyembunyikan fakta kerjasama TNI-milisi agar tidak diketahui oleh delegasi PBB yang akan berkunjung.

Dokumen rahasia TNI yang lain, tertanggal 12 April 1999, mengungkap pola yang sama—sebuah rencana yang disusun dengan baik oleh para perwira militer untuk mengendalikan sementara kekerasan milisi dalam rangka mengelabui para pengamat internasional. Dokumen berupa telegram itu adalah perintah dari Kolonel Tono Suratman kepada banyak jenis komandan operasi, termasuk komandan Satgas Tribuana Kopassus, dan komandan militer Sektor A dan B. Perintah itu

.....
* Lihat: Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan lain-lain. Telegram rahasia No. TR/41/1999, 28 Januari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #7).

dibuka dengan menyebut “bentrokan” kekerasan di Liquiça pada 5 April yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Namun inti persoalannya terungkap dalam paragraf berikutnya dari telegram tersebut, yang menyebutkan “Jadwal kegiatan tamu asing (Atase Pertahanan, Duta Besar, LSM) untuk mengunjungi wilayah Timor-Leste khususnya ke daerah Liquiça” dalam minggu-minggu mendatang. Sehubungan dengan kunjungan tersebut, para penerima telegram diperintahkan:

“Untuk menghindari sorotan tamu asing terhadap kegiatan operasi teritorial, untuk sementara waktu kegiatan dialihkan kepada kegiatan pengamanan pangkalan.”

Alasan yang mendasari perintah ini begitu terang-terangan. Para pejabat TNI mengetahui—atau mungkin telah diberitahu oleh atasan mereka di Jakarta—bahwa secara politis akan merugikan posisi internasional Indonesia jika delegasi luar negeri yang terdiri atas para Atase Militer, Duta Besar, dan organisasi nonpemerintah melihat adanya bukti kerjasama TNI-milisi. Oleh karenanya, selama waktu kunjungan tersebut, para komandan unit diperintahkan tidak menjalankan operasi-operasi seperti itu.[†]

Pola manipulasi resmi atas kekerasan mengemuka kembali di pertengahan Juli 1999, seminggu sebelum Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dijadwalkan untuk menentukan apakah proses pendaftaran pemilih, dan Konsultasi Rakyat secara keseluruhan, bisa dilanjutkan. Keprihatinan yang serius telah dinyatakan PBB menyangkut situasi keamanan yang rentan dan ada kemungkinan nyata bahwa Annan akan mengeluarkan keputusan negatif, dan meletakkan beban kesalahan pada kegagalan Indonesia untuk menyediakan kondisi keamanan yang diperlukan. Keputusan seperti itu pasti akan merusak wibawa pemerintah Indonesia di mata internasional dan strategi mereka di Timor-Leste. Pemerintah menggarisbawahi keprihatinannya dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi menteri-menteri kabinet ke Dili pada 12 Juli untuk bertemu dengan UNAMET dan para pejabat lokal.

Karenanya, merupakan sesuatu yang penting bahwa mendekati hari yang menentukan itu, terjadi penurunan cukup besar kegiatan milisi. Meskipun masih terjadi kekerasan, namun banyak ancaman serangan besar dan terkoordinasi oleh milisi terhadap penduduk setempat dan staf UNAMET tidak menjadi kenyataan.* Indikator yang lebih umum dari kegiatan milisi—penghadangan di jalan, insiden

* Lihat: Wakil Danrem 164/WD (Kolonel Mudjiono) atas nama Danrem 164/WD, kepada Dansektor A dan B, dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/43/1999, 12 April, 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #12).

† Perintah Danrem diturunkan ke tingkat yang lebih rendah dalam hierarki TNI pada hari-hari berikutnya. Dalam sebuah telegram tertanggal 16 April 1999, Dandim Dili, Letnan Kolonel Endar Priyanto, meneruskan perintah yang sama ke semua komandan operasi di wilayah komandonya. Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Kapolres Dili, Dan Yonif 521/DY, dan lain-lain. Telegram rahasia, No. STR/192/1999, 16 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #50).

‡ Ini meliputi beberapa yang mengakibatkan dilakukannya penutupan sementara tempat-tempat pendaftaran di empat atau lima lokasi.

penembakan, pembakaran rumah, dan pemukulan—juga menurun selama periode ini. TNI, Polri, dan sejumlah pejabat sipil Indonesia tampak berusaha bertindak sesuai dengan Kesepakatan 5 Mei.

Kantor Urusan Politik UNAMET melihat ketenangan tersebut sebagai bukti bahwa kekerasan sedang diatur di tingkat yang tinggi—dari markas besar TNI, di bawah tekanan dari Departemen Luar Negeri dan Presiden—dan bahwa kekerasan akan dapat dimulai lagi secepat ia berakhir. Perumpamaan yang mereka gunakan adalah kran air, yang dapat dibuka dan ditutup sesuai keinginan. Apa yang sedang terjadi di pertengahan Juli, mereka yakini, adalah sebuah contoh bagaimana kekerasan sedang ditutup alirannya, dalam sebuah usaha resmi yang dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari keputusan negatif pada pertengahan jalan proses pendaftaran. Kantor Urusan Politik UNAMET pun berpendapat, jika kekerasan dapat ditutup alirannya, aliran kekerasan itu pun dapat juga dengan mudah dibuka kembali.[†]

Bukti dokumenter yang ditemukan sejak waktu itu memberikan dukungan yang kuat bagi kesimpulan tersebut. Bukti itu mencakup sebuah telegram rahasia dari Dandim Dili kepada semua Danramil, yang memerintahkan mereka untuk memberlakukan keamanan yang lebih ketat terhadap gudang-gudang senjata, untuk membantu Polri dan pejabat-pejabat pemerintah dalam mengendalikan milisi, dan khususnya membantu pembongkaran rintangan-rintangan jalan. Bagian yang relevan dari perintah tersebut berbunyi:

“1.BB. Senjata hanya digunakan untuk kepentingan dinas, setelah selesai melaksanakan tugas, senjata dimasukkan kembali ke dalam gudang. 2. AA. Agar para komandan kesatuan membantu Pemerintah Daerah dan Polri dalam upaya menertibkan Pam Swakarsa di wilayah masing-masing. 2.BB. Koordinasikan dengan aparat kepolisian untuk membuka kembali jalan-jalan yang ditutup portal ...”[†]

Instruksi ini dikeluarkan sebagai kelanjutan dari satu perintah tentang hal yang sama yang dikeluarkan oleh Danrem pada 17 Juli 1999.

Dilihat dari waktu diberikannya perintah-perintah tersebut, terhapuslah keraguan bahwa perintah itu keluar untuk menanggapi tekanan kuat PBB dan

.....
* Laporan situasi mingguan yang ditulis oleh Kantor Urusan Politik UNAMET, untuk periode 12-18 Juli 1999 menyatakan: “Ada tanda-tanda perbaikan yang lumayan dalam suasana keamanan di distrik-distrik tertentu selama minggu ini, tetapi masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa kondisi keamanan yang diperlukan untuk Konsultasi Rakyat yang adil dan bebas telah tercapai. Alasan utama untuk waspada adalah bahwa belum ada satu perubahan yang dapat dibuktikan menyangkut segi-segi dasar yang melandasi ketidakamanan, dengan akibat bahwa setiap perubahan yang tampak akan dapat dengan cepat berbalik”. UNAMET, Political Affairs, “Weekly Sitrep #3 (12 July-18 July).” Dicitak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book on Political Affairs and Human Rights in East Timor*, Dili, November 1999.

† Lihat: Dandim 1627/Dili kepada Danramil 01-04 dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/173/1999, 20 Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #37).

dunia internasional agar TNI memperbaiki situasi keamanan atau berisiko menghadapi keputusan negatif yang akan menghentikan seluruh proses. Sama pentingnya juga, perintah-perintah itu membenarkan analisis UNAMET bahwa para pejabat militer memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup kran kekerasan, dan bahwa mereka melakukannya sesuai dengan kebutuhan politik mereka sendiri.

Kejadian-kejadian pada Agustus memberikan dukungan tambahan bagi penafsiran tersebut. Ketika akhir proses pendaftaran semakin dekat di awal Agustus, terjadi serangan serius milisi terhadap staf UNAMET di Bobonaro dan Ainaro, serta ketegangan mendadak berupa kekerasan di Dili pada hari terakhir kampanye yang mengakibatkan setidaknya delapan orang terbunuh. Gelombang kekerasan pada Agustus tersebut diikuti dengan penghentian hampir sepenuhnya kegiatan milisi pada hari pemungutan suara, 30 Agustus, dan selama penghitungan suara pada hari-hari selanjutnya.⁷

Dua kegiatan tersebut—pemungutan suara dan penghitungan suara—membuka kesempatan yang cukup besar bagi milisi pro-Indonesia untuk menghentikan sepenuhnya seluruh proses, tetapi mereka tidak melakukannya. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk adanya ketenangan yang tiba-tiba dalam situasi penuh kekerasan pada saat kritis semacam itu adalah bahwa milisi dan pelindung Indonesia mereka tetap yakin pihak mereka berkemungkinan menang. Sebenarnya, dalam komentar kepada media setelah pemungutan suara, pejabat-pejabat penting Indonesia—termasuk Ali Alatas dan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim—menunjukkan bahwa mereka menduga menang atau kalah dengan perbedaan suara tipis.⁸ Jika mereka meyakini yang sebaliknya, maka hari pemungutan suara dan penghitungan suara akan menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan intimidasi dan kekerasan, bukan menghentikannya. Fakta bahwa pola yang sama muncul di seluruh Timor-Leste tampaknya menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak menyerang pada hari-hari tersebut pasti merupakan keputusan yang dibuat di tingkat tinggi.

Akhirnya, patut dicatat bahwa kegiatan milisi, yang oleh para pejabat Polri dan TNI selalu diklaim tidak bisa dikendalikan, tiba-tiba berhenti pada hampir semua kesempatan kunjungan delegasi penting tingkat tinggi di wilayah Timor-Leste. Sebagaimana telah dikemukakan, hal ini terjadi pada Februari, April, dan mendekati pertengahan masa pendaftaran pada Juli. Namun, peristiwa yang paling menarik perhatian terjadi pada 11 September 1999, ketika delegasi Dewan Keamanan PBB dan Jenderal Wiranto mengunjungi Dili untuk menyelidiki laporan-laporan tentang kekerasan milisi dan TNI.

.....
* Sejumlah tempat pemungutan suara harus ditutup sementara selama sehari sebagai akibat dari ancaman atau tindak kekerasan, tetapi secara keseluruhan proses pemungutan suara berjalan jauh lebih lancar daripada yang diperkirakan. Hal yang sama juga terjadi dengan penghitungan suara yang dilakukan di dalam museum pemerintah yang bersebelahan dengan markas besar Kepolisian Daerah (Polda) di Dili di antara 31 Agustus dan 4 September.

† Berbicara kepada wartawan pada Januari 2000, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim mengatakan: "Dalam prediksi kami, kami menang atau kalah dengan perbedaan suara tipis ... Tetapi hanya 21 persen yang memilih kekuasaan Indonesia tetap di Timor Timur... Itu benar-benar mengecewakan." *South China Morning Post*, 5 Januari 2000.

Terselip di antara beberapa hari penembakan dan pembakaran yang tanpa henti, pada hari kunjungan nyaris tidak ada insiden. Bagi mereka yang pernah berada di Timor-Leste untuk beberapa waktu, termasuk para analis di Kantor Urusan Politik UNAMET, kejadian ini bukanlah kejutan. Kejadian itu adalah bukti lebih jauh bahwa kekerasan dapat dibuka-ditutup seperti sebuah kran, sesuai dengan kepentingan atau keinginan politik para pejabat tinggi TNI dan pemerintah Indonesia.

Dengan adanya bukti tersebut, pola kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia setelah pernyataan Keadaan Darurat pada 7 September 1999, secara khusus terungkap. Di setiap kabupaten di seluruh Timor-Leste, tampak pasukan TNI bergabung dengan milisi dalam sebuah serangan sistematis berupa pembakaran dan penjarahan, atau setidaknya tidak melakukan apa-apa untuk menghentikannya. (Lihat ringkasan kabupaten.)

Di Manatuto, misalnya, para Perwira Penghubung Militer UNAMET menyaksikan TNI mengangkut sejumlah drum minyak yang kemudian digunakan dalam sebuah operasi pembakaran selama enam hari yang terencana dengan baik, yang akhirnya memusnahkan kota. Walaupun benar bahwa operasi itu dimulai sebelum 7 September, namun penetapan Keadaan Darurat tidak tampak menghalangi atau memperlambat samasekali operasi pembakaran tersebut. Pola yang sama diamati pula secara langsung oleh sejumlah anggota UNAMET, termasuk Kepala Perwira Penghubung Militer, yang menyaksikan prajurit-prajurit TNI membakari gedung-gedung di seluruh Dili jauh sesudah Keadaan Darurat diumumkan dan setelah TNI mengambil kendali penuh atas wilayah Timor-Leste.

Bahkan yang mungkin lebih mencolok adalah setelah penetapan Keadaan Darurat, banyak dari pembantaian paling hebat terjadi, semuanya melibatkan TNI dan atau Polri. Misalnya:

- Pada 8 September, para anggota milisi dan prajurit TNI membunuh sedikitnya 14 orang, kalau tidak lebih banyak lagi, yang mengungsi di kantor Polisi Maliana. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Kantor Polisi Maliana.)
- Antara 8 dan 10 September, para anggota milisi bersama dengan prajurit TNI menangkap dan mengeksekusi sedikitnya 82 orang dari empat desa di Kabupaten Oecussi, dalam pembunuhan massal yang paling terpadu di Timor-Leste. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Passabe dan Maquelab.)
- Dalam sebuah serangan penuh kekerasan yang sistematis, ketika bergerak dari markasnya di Los Palos ke Timor Barat pada September, para prajurit Batalion 745 membunuh sebanyak 21 orang, termasuk seorang jurnalis Belanda. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)
- Pada 25 September, beberapa anggota milisi bersenjata yang dilatih Kopassus dari Los Palos menyergap dan mengeksekusi lima orang rohaniwan dan empat orang awam ketika mereka berkendara di jalan menuju Baucau (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan Rohaniwan Los Palos).

Beberapa pengamat mengemukakan bahwa para perwira tinggi TNI tertentu, walaupun tidak berhasil, berusaha mengendalikan milisi dan pasukan teritorial,

tidak lama sebelum dan setelah penetapan Keadaan Darurat. Menurut satu laporan yang belum dipastikan, misalnya, Jenderal Wiranto berusaha memerintahkan penarikan milisi ke Timor Barat sebelum pemungutan suara, tetapi tidak mampu membuat perintahnya berlaku karena penentangan dari dalam TNI. Demikian pula, beberapa orang yang memiliki hubungan langsung dengan kepemimpinan TNI pada saat itu, mengklaim bahwa Panglima Keadaan Darurat Mayor Jenderal Kiki Syahnakri dan Kolonel Noer Muis berusaha mengendalikan kekerasan selama masa Keadaan Darurat. Jika klaim-klaim ini dapat dibuktikan kebenarannya, klaim-klaim ini mungkin dapat memengaruhi penilaian-penilaian tentang kesalahan perwira-perwira tertentu. Klaim-klaim tersebut juga akan dapat membantu mengklarifikasi apakah kekerasan yang terjadi setelah penghitungan suara diperintahkan melalui rantai komando yang normal atau tidak. Namun, klaim-klaim tersebut tidak akan mengubah kesimpulan-kesimpulan umum yang dibuat di sini—bahwa tindak kekerasan yang paling serius dilakukan setelah penetapan Keadaan Darurat, dan bahwa beberapa perwira tinggi TNI mengoordinasi atau membiarkan kekerasan tersebut.

Terus terjadinya kekerasan yang tampak terkoordinasi setelah pernyataan Keadaan Darurat memiliki nilai penting tersendiri, karena Keadaan Darurat melibatkan pengerahan pasukan Kostrad. Tidak seperti pasukan teritorial dan pasukan lainnya yang telah berada di Timor-Leste selama beberapa waktu—dan yang dianggap telah ‘terkontaminasi’ hubungan dengan milisi—pasukan Kostrad ini adalah pasukan baru dan dikomandoi secara terpusat. Lebih jauh, mereka dianggap loyal kepada Jenderal Wiranto, yang bertugas sebagai Panglima Kostrad pada 1996-1997. Oleh karena sebab-sebab ini, sementara pengamat mengira bahwa pasukan Kostrad akan lebih berdisiplin dan bahwa mereka akan memutus cengkeraman “oknum-oknum” di dalam TNI yang bisa jadi telah membantu milisi. Tetapi sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh bukti-bukti yang disebutkan terdahulu, kenyataannya berbeda.

Singkatnya, pola waktu terjadinya kekerasan menghapus keraguan bahwa kekerasan bersifat sistematis dan bahwa kekerasan itu pada tingkat tertentu dikoordinasi oleh TNI dan pihak-pihak berwenang lain dalam pemerintah.

Ketidakbertindakan dan keterlibatan polisi

Pandangan bahwa kekerasan yang terjadi itu direncanakan, dan bukan spontan, memperoleh dukungan lebih jauh dalam pola perilaku Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pola yang paling jelas adalah kegagalan terus-menerus Polri dalam menangani tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi ketika kekerasan itu berlangsung, atau dalam mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menyelidiki atau menghukum mereka setelah terjadinya kekerasan tersebut.

Satu contoh yang paling jelas dari pola ini adalah tindakan Polri terhadap serangan milisi terhadap rombongan bantuan kemanusiaan di Liquiçá pada 4 Juli. Meskipun ada peringatan jelas bahwa rombongan tersebut kemungkinan diserang, dan

walaupun ada permintaan berulang-ulang dari UNAMET agar Polri melakukan pengawalan resmi, tidak satu pun permintaan itu dipenuhi. Polri juga gagal mengambil tindakan ketika serangan terjadi, walaupun kantor Kepolisian Resor (Polres) hanya berada dalam jarak beberapa menit dari tempat kejadian bila ditempuh dengan menggunakan mobil. Lebih lanjut, setelah serangan itu Polri tidak berusaha menangkap atau bahkan menanyai satu pun anggota milisi yang terlihat menyerang rombongan tersebut dengan senjata. Sebaliknya, mereka bekerjasama dengan milisi untuk menangkap orang-orang yang melarikan diri dari serangan tersebut. Ketika petugas UNAMET dan organisasi-organisasi nonpemerintah berkendara menuju Dili dengan mobil mereka yang rusak, mereka dihalangi perintang jalan di depan kantor Kepolisian Resor (Polres) Liquiçá. Perintang jalan itu dijaga oleh dua anggota milisi yang salah satunya membawa sebuah senapan otomatis. (Lihat studi kasus: Penyerangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan.)

Para anggota milisi yang diketahui melakukan tindakan-tindakan kekerasan hampir tidak pernah ditahan atau diproses hukum atas kejahatan apapun. Satu-satunya pengecualian terjadi di tengah munculnya tekanan internasional yang kuat dan intervensi politik pada tingkat tertinggi. Sebagai tanggapan pada tekanan semacam itu, sejumlah anggota milisi ditahan dan dituntut sehubungan dengan serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan pada 4 Juli, dan serangan terhadap kantor UNAMET di Maliana pada tanggal 29. Namun, kasus-kasus tersebut tidak dengan sungguh-sungguh diproses hukum dan, setelah menerima penangguhan hukuman yang pendek selama empat atau lima bulan, semua tertuduh dibebaskan.*

Persoalannya bukan ambiguitas hukum. Bahkan di Timor-Leste, hukum Indonesia jelas melarang pembunuhan, penculikan, penghancuran harta-benda, dan membawa senjataapi tanpa izin, sehingga ada dasar hukum yang cukup jelas bagi Polri untuk menindak milisi. Lebih lagi, di bawah kerangka Kesepakatan 5 Mei, Polri diberi tanggung jawab tunggal untuk memelihara keamanan dan ketertiban selama Konsultasi Rakyat. Persoalannya juga bukan pelatihan dan keahlian yang kurang memadai. Kadang-kadang polisi bertindak tegas dan profesional, walaupun itu biasanya dalam mengejar seseorang dari pihak prokemerdekaan yang dituduh melakukan tindakan kriminal.

Persoalan sebenarnya adalah bahwa Polri secara politik dan operasional berada di bawah TNI.† Dalam hal milisi Timor-Leste didukung oleh TNI—dan Polri jelas mengetahui hal ini—kesempatan menjadi amat sangat kecil bagi Polri untuk berani menindak mereka. Sesungguhnya, para perwira Polri mengatakan kepada para Polisi Sipil PBB (UN Civpol) bahwa mereka terhambat oleh TNI. Ini bukan

* Lihat UNAMET, Political Affairs Office, "Weekly Sitrep #4 (26 July-1 August)," halaman 3-4; "Weekly Sitrep #5 (2 August-8 August)," halaman 4; "Weekly Sitrep #6 (9 August-15 August)," halaman 4. Dicitak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

† Berbicara kepada seorang wartawan Australia di akhir 1999, misalnya, seorang mantan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan: "Tentang siapa yang memiliki otoritas tertinggi, kita semua tahu itu TNI." ABC, *Four Corners*, "The Vanishing," 18 Oktober 1999, transkrip, halaman 9.

hanya persoalan mengikuti tuntutan atau perintah TNI. Tetapi ini juga akibat dari sebuah persepsi umum bahwa sebagian anggota milisi sebenarnya adalah prajurit TNI, mungkin bahkan Kopassus. Dalam keadaan seperti ini, Polri takut bertindak dengan sungguh-sungguh.

Hakikat persoalannya tergambarkan dengan baik melalui pengalaman satu tim UNAMET yang pergi menuju Kecamatan Atsabe pada 31 Agustus 1999 untuk menyelidiki pembunuhan terhadap João Lopes, salah satu dari dua staf lokal UNAMET yang dibunuh di wilayah itu oleh milisi pada hari pemungutan suara. Ketika mendekati bangunan di mana jenazah Lopes terbaring, tim UNAMET melihat bahwa jenazah itu dikelilingi oleh sekitar 50 orang anggota milisi —yang sebenarnya adalah orang-orang yang telah membunuh João Lopes—bersenjatakan parang, senjata api rakitan, dan senapan. Bercampur bersama para milisi adalah para anggota Polri dan TNI. Pembicaraan panjang dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) setempat dan seorang perwira Polri yang berbasis di Ermera menghasilkan jaminan bahwa kerumunan milisi itu akan dibubarkan dan dikendalikan. Tetapi tidak ada tindakan yang diambil, dan milisi tetap berada di tempat yang berdekatan, dengan senjata di tangan. Sebagai tanggapan terhadap protes dari pihak UNAMET, Kapolsek dan perwira dari Ermera tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak berani memerintahkan milisi untuk melakukan sesuatu, karena mereka sangat mungkin akan berbalik menyerang Polri. (Lihat studi kasus: Pembunuhan staf UNAMET di Boboe Leten.)

Polri juga mengambil bagian dalam operasi-operasi yang memfasilitasi kekerasan TNI dan milisi. Beberapa dari operasi tersebut, dinilai dari jangkauannya, pasti direncanakan di tingkat provinsi ataupun di tingkat yang lebih tinggi. Bukti paling kuat tentang hal tersebut bisa dilihat pada periode setelah pemungutan suara, dan khususnya pada perilaku Polri dan TNI selama evakuasi personel UNAMET dari kantor-kantor tingkat kabupaten di awal September. Peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terjadinya evakuasi besar-besaran itu memiliki kesamaan besar yang mengerikan dengan, dan tanda-tanda dari, suatu operasi perang psikologis yang terencana dengan baik. Satu laporan UNAMET mengenai evakuasi dari lima kantor kabupaten pada 3 dan 4 September menyimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi merupakan bagian dari satu “strategi yang terencana dengan baik untuk memaksa UNAMET mundur dari beberapa wilayah tertentu kembali ke Dili.” Jika ditinjau kembali, jelas bahwa tujuan penting dari operasi tersebut adalah untuk meneror staf internasional UNAMET dan semua pengamat internasional lainnya, dengan maksud membuat mereka meninggalkan Timor-Leste.

Dalam setiap kejadian, urutannya dimulai dengan milisi berkeliaran secara bebas di seluruh kota utama, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih berat daripada biasanya. Lalu mereka menembak, menyulut api dan membakar gedung, serta membunuh. Dalam setiap kasus, Polri maupun TNI tidak berusaha melakukan

* UNAMET, Political Affairs Office, “Incidents on 3 and 4 September which led to the relocation to Dili of UNAMET staff from Aileu, Ainaro, Maliana, Liquiçá and Same regencies.” Dicitak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

tindakan untuk menghalangi milisi, melainkan justru giat membantu mereka. Dalam beberapa jam, Polri di kabupaten yang terkena serangan memperingatkan bahwa mereka tidak lagi bisa mengendalikan keadaan, dan menyarankan agar semua staf UNAMET mengungsi ke kantor Polres. Setelah mereka mengumpulkan staf PBB di kantor mereka, tiba-tiba mereka menyatakan bahwa mereka akan pergi, dan menyarankan UNAMET untuk mengikuti. Karena tidak memiliki penjamin untuk keamanan mereka sendiri, dan terputus dari semua sumber informasi independen, para pejabat UNAMET di tingkat kabupaten tidak memiliki pilihan kecuali pergi bersama polisi. Demikianlah, mereka bergabung dengan konvoi Polri keluar dari kota kabupaten dan kembali ke Dili.

Dari waktu ke waktu Polri bergerak melampaui ketidakmampuan umum mereka untuk bertindak atau memfasilitasi kekerasan milisi, dan benar-benar berperan langsung sebagai pelaku kekerasan. Hal ini khususnya dilakukan oleh kesatuan Brigade Mobil (Brimob) Polri, yang dalam jumlah beberapa ribu orang ditempatkan di Timor-Leste selama Konsultasi Rakyat. Dalam sebuah insiden di Dili, pada hari terakhir kampanye (26 Agustus 1999), seorang anggota Brigade Mobil berseragam menembakkan senapan otomatisnya ke arah seorang penduduk sipil pada bagian punggung, yang langsung menewaskan orang sipil tersebut. Korban sipil itu adalah seorang mahasiswa bernama Bernardino Augusto Guterres (alias Bernardino da Costa). Insiden tersebut disaksikan oleh sejumlah orang yang berada di tempat dan terekam dalam video. Dalam sebuah pernyataan di bawah sumpah kepada Komisi Pemilihan (*Electoral Commission*) independen yang mengawasi proses pemungutan suara, salah seorang saksi mata menggambarkan insiden tersebut:

*Kerumunan orang berteriak kepada Polisi untuk menghentikan milisi yang menembak. Salah seorang dari kerumunan ... memprotes Polisi, dengan mengarahkan perhatian Polisi kepada milisi. Seorang Polisi yang tidak menggunakan baret seperti teman-temannya ... mengatakan [kepada si pemuda] bahwa ia dapat menembaknya karena si pemuda menghasut orang-orang. [Pemuda itu] berbalik dan lari. Polisi itu lalu menembaknya pada jarak sekitar tiga langkah. Saya kemudian melihat sebuah luka tembak di tengah punggung si pemuda dan satu di belakang lehernya. Pemuda itu meninggal di tempat. Ketika petugas ambulans mengangkat jasadnya kemudian, saya melihat sebuah luka dengan lubang besar menganga di tenggorokan.**

Seorang penduduk lokal yang menelepon UNAMET kemudian pada hari yang sama, mengatakan bahwa Polri terlihat memberikan senjata kepada para anggota milisi sebelum dan sesudah insiden. Orang lain yang ada di tempat kejadian mengatakan bahwa para anggota milisi Aitarak sesungguhnya adalah prajurit TNI. Klaim-klaim ini tidak pernah diuji secara independen, namun sejalan dengan pola dukungan resmi kepada milisi yang sudah kuat.

* UNAMET, Electoral Commission, "Statement Minuted on Friday, August 27, 1999."

Ringkasnya, terdapat satu kumpulan besar bukti, berdasarkan pengamatan lapangan, bahwa Polri tidak mau atau tidak mampu bertindak untuk mencegah atau menghentikan kegiatan melanggar hukum yang dilakukan oleh milisi, dan bahwa sebabnya terutama terletak pada subordinasi posisi Polri terhadap TNI. Kesimpulan ini tidak hanya berdasarkan pada satu tindakan atau kejadian semata, tetapi berdasarkan pada analisis mengenai perilaku yang jelas berpola.

Fakta bahwa jenis perilaku yang sama dari Polri terlihat secara konsisten di seluruh wilayah Timor-Leste, sangat kuat menunjukkan bahwa ini merupakan persoalan kebijakan, setidaknya setinggi tingkat regional (Polda). Pola perilaku yang sama dan mengerikan pada saat pemindahan paksa penduduk di awal September menunjukkan kesimpulan yang sama. Bukti dokumenter juga menegaskan bahwa peran Polri dalam pemindahan tersebut sudah direncanakan di tingkat provinsi (Polda). Namun, karena kita mengetahui (dari dokumen-dokumen yang dianalisis dalam Bab 5 laporan ini), bahwa perencanaan strategis keseluruhan evakuasi dibuat di markas besar TNI di Jakarta, kita dapat meyakini dengan cukup alasan bahwa perilaku Polri yang terlihat ini telah dirancang pada tingkat itu, dan sangat mungkin di bawah pengarahannya TNI.

Modus Operandi milisi

Gaya dan *modus operandi* kelompok-kelompok milisi hampir sama di manapun di Timor-Leste. Kesamaan yang luas ini, di ke-13 kabupaten, memberikan petunjuk tambahan tentang perencanaan dan koordinasi milisi oleh militer dan pihak-pihak berwenang pemerintah, setidaknya di tingkat provinsi, dan mungkin lebih tinggi lagi.

Gaya milisi dirancang untuk mengelabui. Sekelompok kecil anggota milisi menggunakan seragam militer Indonesia, atau salah satu bagiannya, tetapi sebagian besar berpakaian 'sipil'—mengenakan bandana berwarna merah dan putih yang diikatkan di leher atau di kepala, dan kerap mengenakan kaos oblong bertuliskan slogan pro-otonomi dan sejenisnya. Pakaian 'sipil' semacam ini agaknya dirancang untuk mempertahankan ilusi bahwa milisi terbentuk secara spontan, dan untuk memberikan dasar yang masuk akal bagi pengingkaran keterlibatan resmi dalam tindak kekerasan.

Jika gaya milisi ditujukan untuk mengelabui, maka *modus operandi* milisi dirancang untuk meneror dan mengintimidasi. Patut dicatat bahwa tidak ada satupun dari metode yang digunakan itu hanya terjadi di Timor-Leste. Sebagaimana gagasan inti penggunaan pasukan milisi 'sipil', *modus operandi* milisi diambil dari seluruh repertoar yang dikembangkan oleh pasukan-pasukan TNI dalam operasi kontrapemberontakan dan anti-kejahatan yang dilaksanakan di bagian-bagian lain Indonesia selama lebih daripada tiga puluh tahun.*

* Untuk pembahasan yang rinci tentang repertoar kontra-pemberontakan TNI, lihat Geoffrey Robinson, "Rawan is as Rawan Does: The Origins of Disorder in New Order Aceh," *Indonesia*, No. 66 (Oktober 1998) halaman 127-156.

Unsur yang paling umum dari repertoar milisi mencakup pembuatan penghalang jalan dan pendirian pos pemeriksaan, pemukulan, pembakaran rumah, ancaman mati di muka umum, mengacungkan dan menembakkan senjata api, dan, terhadap perempuan, berupa ancaman dan kenyataan kekerasan seksual termasuk pemerkosaan.^{*} Ketika tidak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, sebagian besar unit-unit milisi menjalani latihan dan baris-berbaris militer dengan memanggul senjata organik maupun rakitan.

Pembunuhan terencana, jasad yang dipamerkan di hadapan publik, dan pemotongan anggota badan juga merupakan bagian dari repertoar dan, lagi-lagi mengikuti standar praktik TNI, ini semua dimaksudkan sebagai contoh—untuk mengirimkan pesan kepada orang-orang lain di dalam komunitas tentang apa yang akan terjadi pada siapa saja yang tidak memperhatikan peringatan milisi atau TNI. Jasad korban sering dipotong dengan berbagai cara—dipenggal hingga tanpa kepala, dikeluarkan isi perutnya, atau dicincang hingga menjadi potongan-potongan kecil—dan kemudian ditinggalkan di tempat umum. Satu laporan tentang milisi di Viqueque, yang disusun oleh Perwira Penghubung Militer (*Military Liaison Officers* – MLO) UNAMET pada Agustus 1999 mengatakan bahwa: “Metode pembunuhannya, seperti yang dilaporkan, sangat mengerikan. Misalnya, sesosok korban dengan otaknya ditembus tulang binatang ... Tampak bahwa tujuannya adalah untuk menimbulkan pengaruh psikologis dan menggunakan cara kematian tersebut untuk mengintimidasi orang lain.”[†]

Unsur umum lainnya dari repertoar milisi yang jelas-jelas ditujukan untuk menerror penduduk adalah memberikan tanda pada yang dijadikan sasaran pembunuhan. Seperti yang dijelaskan dalam laporan UNAMET dari Viqueque:

“Ini adalah satu strategi dasar perang psikologis, yang bisa mencakup ancaman terhadap seorang korban yang disampaikan kepada masyarakat luas untuk memastikan ancaman itu sampai ke sasaran. Taktik lainnya yang tercatat di dalam wilayah kami adalah praktik menandai rumah-rumah dengan tanda ‘X’ berwarna merah yang menyatakan bahwa penghuninya telah ditandai untuk dibunuh.”[‡]

Dalam pandangan para analis UNAMET, maksud dari taktik semacam itu adalah untuk mencapai sebuah tujuan psikologis “... seperti menunjukkan kepada penduduk bahwa milisi memiliki kekuatan untuk membidik dan membunuh seseorang.”

^{*} Para prajurit TNI juga secara langsung terlibat dalam pemerkosaan dan perbudakan seksual. Untuk perincian yang lebih jauh lihat United Nations, *Situation of human rights in East Timor*, December 10, 1999, halaman 9-11.

[†] UNAMET Viqueque, “Outline of Pro-Integration Militia in Viqueque Area,” August 6 1999, halaman 3. Dicitak kembali dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

[‡] UNAMET Viqueque, “Outline of Pro Integration Militia in Viqueque Area,” August 6, 1999, halaman 4. Dicitak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

Cara milisi menyerang sasarannya terbukti dimaksudkan untuk menghasilkan akibat psikologis yang sama. Ketika milisi melancarkan sebuah serangan, mereka tidak melakukannya dengan ketepatan yang baik dari regu pembunuh profesional. Tetapi, mereka menciptakan kesan sebagai orang-orang yang penuh amarah, berteriak-teriak, dan membelah udara dengan senjata mereka. Dengan kata lain, mereka berlaku seperti apa yang dibayangkan tentang orang-orang yang “mengamuk”.

Gaya ‘amuk’ dari serangan milisi terekam dalam banyak gambar yang disiarkan televisi dari Timor-Leste antara Juni dan September 1999. Salah satu dari insiden-insiden yang paling awal dan mengerikan dari jenis ini muncul pada 4 Juli, ketika para anggota kelompok milisi Besi Merah Putih menyerang rombongan bantuan kemanusiaan yang berhenti sejenak ketika melewati kota Liquiçá.[†] (Lihat studi kasus: Penyerangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan.) Satu laporan UNAMET tentang serangan tersebut memberikan uraian berikut ini:

“Sekitar lima menit setelah rombongan berhenti di Liquiçá, sebuah mobil mini-van berwarna biru-hijau dengan tulisan ‘Miramar’ di sisinya, menuruni bukit dengan cepat dari arah selatan, datang dan berhenti tiba-tiba di tengah deretan kendaraan yang berhenti. Ketika mobil van itu berhenti, sekitar 20 orang pemuda melompat keluar dan mulai mendekati staf organisasi-organisasi nonpemerintah dan UNAMET, sambil berteriak ‘bunuh mereka!’ Sebagian besar membawa parang, pisau, atau senapan rakitan. Setidaknya salah seorang anggota kelompok membawa senapan otomatis. Tanpa peringatan maupun provokasi para anggota milisi mulai menyerang, mengayun-ayunkan parang dan pisau mereka secara membahayakan, mengarahkan senjata mereka kepada para anggota rombongan, dan menghancurkan kaca jendela sebagian besar kendaraan. Serangan berlanjut ketika orang-orang berusaha melarikan diri...”[†]

Kesamaan yang menonjol di dalam repertoar kekerasan milisi di seluruh Timor-Leste tampak menegaskan bahwa para milisi dilatih dan tindakan mereka direncanakan dengan baik oleh TNI. Perilaku milisi yang tersebut begitu menyebar luas, dan begitu konsisten, sehingga hanya dapat dipahami dengan baik sebagai produk dari perencanaan yang terkoordinasi, setidaknya pada tingkat provinsi (Korem). Bahkan jika semua tindakan milisi bukan merupakan hasil langsung dari koordinasi TNI, sangatlah jelas bahwa para milisi tidak akan dapat berlaku sebagaimana yang mereka lakukan tanpa persetujuan dan dukungan dari TNI, dan pada tingkat yang lebih rendah, dari Polri.

.....
* Serangan 4 Juli tidak muncul tersendiri. Pada hari-hari sebelumnya, staf PBB di Liquiçá telah menjadi sasaran dari serangkaian ancaman dan serangan. Pada umumnya para anggota Besi Merah Putih mencaci-maki staf PBB, sambil mengacungkan senjata api atau parang. Masing-masing insiden telah dilaporkan kepada Polri. Hasilnya beberapa tambahan petugas polisi ditempatkan untuk melindungi staf UNAMET. Tetapi tidak ada yang dilakukan untuk mencegah milisi, yang tetap bersenjata, agar tidak bergerak bebas di kota dan agar tidak melakukan intimidasi.

† UNAMET, Political Affairs Office, “Report on the Liquiçá Incidents of 4 July,” July 12, 1999, halaman 3. Dicitak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

Variasi geografis

Meskipun benar bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste bervariasi secara sistematis sepanjang waktu, dan bahwa para pelakunya menjalankan *modus operandi* yang demikian sama di mana pun mereka berada, ada variasi geografis yang signifikan di dalam intensitas dan frekuensi pelanggaran. Secara paradoks, perbedaan tersebut memberikan dukungan tambahan pada klaim bahwa kekerasan tersebut adalah sesuatu yang terencana dan bukan spontan.

Kelompok-kelompok milisi tidaklah muncul secara serentak atau merata di seluruh Timor-Leste. Secara umum, kelompok-kelompok milisi pertama kali didirikan di kabupaten-kabupaten di bagian barat dan tengah dan agak kemudian di wilayah timur, dan di wilayah kantong Oecussi. Kabupaten-kabupaten yang ada di bagian barat dan tengah juga memiliki jumlah anggota milisi yang lebih besar dan penetrasi kelompok yang lebih dalam hingga turun ke tingkat kecamatan dan desa. Bukanlah suatu kebetulan bahwa kelompok-kelompok milisi yang paling terkenal dan paling ditakuti—seperti BMP, Aitarak, Mahidi, Laksaur, Darah Integrasi, Dadurus Merah Putih, dan Halilintar—semuanya terkonsentrasi di kabupaten-kabupaten bagian barat.

Demikian juga ada beberapa keragaman geografis di dalam intensitas kekerasan. Di dalam periode pra-UNAMET dan UNAMET, wilayah yang paling buruk adalah beberapa kabupaten yang ada di bagian barat, yaitu Bobonaro, Liquiçá, dan Covalima, sementara kabupaten Dili, Ermera, dan Ainaro kadang-kadang mencapai tingkat ketidakamanan yang sama. Sebaliknya di sebagian besar kabupaten bagian tengah dan timur, yaitu Aileu, Manufahi, Manatuto, Baucau, Lautém, dan Viqueque bersama dengan wilayah kantong Oecussi, relatif tenang, dan milisi kurang begitu aktif, setidaknya sebelum periode setelah pemungutan suara.

Secara sekilas, keragaman tersebut tampak membenarkan klaim bahwa kekerasan 1999 bersifat spontan. Namun melalui analisis yang lebih dalam, keragaman tersebut sangat menunjukkan bahwa kekerasan berasal dari sebuah pola jaringan yang sistematis di antara milisi dan pihak-pihak berwenang Indonesia yang khas terjadi di kabupaten-kabupaten di bagian barat. Secara lebih khusus, milisi cenderung lebih kuat dan lebih kejam di wilayah-wilayah: (i) yang berbatasan dengan Indonesia; (ii) yang pihak berwenang sipil dan militernya memainkan peran agresif dalam mendukung mereka; dan (iii) yang di dalamnya terdapat jaringan kelompok pro-Indonesia yang terbangun sudah sejak lama dan beroperasi sebelum 1999.

Faktor pertama, dan mungkin yang paling penting, menjelaskan mengapa konsentrasi kekerasan terjadi di kabupaten-kabupaten bagian barat yakni karena kedekatan geografisnya dengan Indonesia. Kabupaten-kabupaten yang paling penuh dengan kekerasan—Covalima dan Bobonaro—berbatasan dengan Timor Barat Indonesia. Kawasan perbatasan menawarkan sejumlah keuntungan, baik dari segi logistik, militer, dan politis, yang memfasilitasi dan mendukung penggunaan kekerasan di sana.

Pertama, wilayah perbatasan bermakna bahwa orang-orang muda akan dapat direkrut dengan mudah di NTT dan diangkut melintasi perbatasan untuk menjadi “milisi Timor Timur”. Kedekatan geografis juga membuat mudah untuk menyusupkan prajurit TNI ke Timor-Leste guna menjalankan operasi rahasia. Satu penyelidikan yang dilakukan oleh satu organisasi nonpemerintah Indonesia di awal Agustus 1999 mengungkapkan bukti penting tentang rekrutmen tersebut dan gerakan melintasi perbatasan yang dilakukan oleh milisi, yang meliputi BMP, Laksaur, Mahidi, dan Ablai. Salah seorang anggota milisi mengatakan kepada para investigator bahwa sekitar 250 orang milisi di Suai sebenarnya berasal dari Belu, NTT. Laporan yang sama mengungkapkan bahwa panglima tertinggi milisi, João Tavares, telah menyewa sebuah rumah di sisi perbatasan NTT, di Atambua, yang dipergunakannya sebagai markas milisi.*

Kawasan perbatasan juga memfasilitasi pelenyapan jasad para korban pelanggaran hak asasi manusia. Pada September 1999, pasukan TNI dan milisi mengangkut setidaknya 27 jasad korban pembantaian di Gereja Suai melintasi perbatasan ke Timor Barat, dan ada kesaksian lisan bahwa jasad korban-korban lainnya juga dilenyapkan dengan cara yang sama. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Gereja Suai.)

Kedekatan geografis juga merupakan sebuah kondisi dasar bagi dilakukannya deportasi paksa besar-besaran penduduk Timor-Leste pada periode setelah pemungutan suara. Sebagian besar dari sekitar 250.000 orang penduduk Timor-Leste yang diungsikan paksa ke NTT berasal dari kabupaten-kabupaten bagian barat yang berbatasan dengan Indonesia. Pengungsian paksa ini tidak akan dapat terjadi dalam skala demikian besar, jika Indonesia tidak mudah dicapai melalui jalan darat. Dukungan pada klaim tersebut terletak pada fakta bahwa sebagian besar yang dipindahkan paksa tinggal di kota-kota dan desa-desa yang terletak di sepanjang jalan utama menuju perbatasan.

Intensitas kekerasan yang besar di kabupaten-kabupaten bagian barat juga jelas berhubungan dengan sikap pihak-pihak berwenang sipil dan militer yang bertugas di wilayah tersebut. Sikap para pejabat lokal dan kabupaten memengaruhi cara penugasan TNI dan Polri di sana, dan juga memengaruhi kekuatan dan tingkat kegiatan kelompok-kelompok milisi di wilayah tersebut.

Sikap para Komandan Distrik Militer (Dandim), dan perwira intelijen militer, amatlah penting. Dandim Bobonaro, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, dan kepala seksi intelijennya, Letnan Sutrisno, luarbiasa bersemangat dalam mendukung milisi, dan Kabupaten Bobonaro merupakan wilayah dengan persoalan hak asasi manusia yang paling tidak pernah berhenti. Para perwira ini—beserta perwira-perwira yang lain di Covalima, Liquiçá, dan Viqueque—dianggap sebagai bagian dari masalah sehingga UNAMET mengajukan pernyataan resmi kepada pemerintah Indonesia kurang daripada dua pekan sebelum pemungutan suara agar mengganti para Dandim itu.†

* Lihat “Hasil Investigasi Forum Solidaritas Perdamaian Timor Leste,” [10] Agustus 1999, Kupang.

† Ian Martin menulis kepada Duta Besar Tarmidzi (Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat

Tampaknya sebagai hasil dari pernyataan resmi tersebut, Dandim Bobonaro dan Covalima dipindahkan dan diganti tidak lama sebelum pemungutan suara.

Untuk berbagai sebab, pemindahan menjelang saat pelaksanaan pemungutan suara ini tidak menyelesaikan persoalan, sebagian karena pemindahan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan. Letnan Kolonel Siagian masih terlihat di Bobonaro pada 30 Agustus dan sesudahnya memimpin pasukan, dan kehadirannya itu bersamaan waktunya dengan adanya laporan pembagian senjata kepada milisi dan peningkatan kekerasan yang dramatis di kabupaten tersebut. Tidak jelas apakah Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus tetap berada di Kabupaten Covalima setelah ia secara resmi diganti. Namun yang sudah pasti penggantinya sebagai Dandim adalah seorang perwira intelijen militer yang ditunjuk langsung oleh Panglima Kodam IX, Mayor Jenderal Adam Damiri. Dandim yang baru, Letnan Kolonel Liliek Koeshadiyanto, terlibat sejumlah kekerasan terburuk di Timor-Leste, termasuk pembantaian di Gereja Suai tanggal 6 September. Kehadirannya di tempat kejadian kejahatan tersebut memperkuat kesimpulan umum bahwa Dandim—dan para perwira militer umumnya—merupakan faktor yang luarbiasa penting dalam membentuk pola kekerasan.

Arti penting khusus dari para Dandim ini juga membantu menjelaskan tingkat kekerasan yang relatif rendah di sejumlah kabupaten. Di Aileu misalnya, Dandim Mayor Maman Rahman tampak kecil perannya dalam menggalang dan mendukung kelompok-kelompok milisi. Ini mungkin karena pangkatnya hanya mayor, lebih rendah daripada pangkat bupati dan berbagai perwira Kopassus di wilayah tersebut, atau karena perwira-perwira lain di kabupaten itu yang mengambil kepemimpinan. Apapun sebabnya, patut diperhatikan bahwa Aileu pada 1999 mengalami tingkat kekerasan milisi yang jauh lebih rendah dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya.

Pola yang sama jelas terlihat di Kabupaten Viqueque. Bagaimanapun juga, Dandim yang ditunjuk tidak lama sebelum referendum, Letnan Kolonel Gustaf Hero, berdampak meredakan pada milisi, dan bekerja aktif membatasi terjadinya kekerasan setelah pemungutan suara di kabupaten tersebut. Usahnya ini membantu menjelaskan mengapa di Kabupaten Viqueque hanya terjadi dua pembunuhan dalam seluruh periode setelah pemungutan suara, yang merupakan tingkat kekerasan terendah di Timor-Leste.

Namun, bukan hanya sikap perwira militer yang memengaruhi persebaran kekerasan secara geografis. Sikap para bupati, camat, dan kepala desa juga membuat perbedaan persebaran tersebut. Secara keseluruhan, kekerasan cenderung paling buruk ketika para bupati memberikan dukungan penuh secara pribadi maupun dinas kepada milisi. Khususnya ini terjadi dalam kasus Liquiçá, Bobonaro, dan Covalima, yang para bupatinya secara langsung dan agresif terlibat pengorganisasian milisi.

di Timor Timur, Indonesia) pada 19 Agustus 1999, yang meminta agar keprihatinannya itu disampaikan kepada yang berwenang di Jakarta (Koleksi SCU, Doc #B). Martin kemudian menulis bahwa dirinya telah meminta penggantian perwira-perwira tersebut karena mereka "lebih memperkuat daripada melawan impunitas milisi, yang beberapa di antara mereka adalah anggota aktif TNI." Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, halaman 76-77.

Pentingnya bupati, sebagai kekuasaan yang potensial independen, juga diperjelas oleh keadaan di Kabupaten Baucau, di mana milisi relatif tetap tenang, bahkan setelah pemungutan suara 30 Agustus. Di sana, walaupun ada tekanan kuat dari Kepala Staf Kodim, bupati aktif menentang pembentukan milisi-milisi baru. Alasan mengapa ia melakukan hal tersebut masih tidak jelas. Terdapat spekulasi bahwa kelompok-kelompok milisi lama—seperti Saka dan Sera—dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan yang dekat dengan bupati, dan ia menganggap pembentukan milisi-milisi baru sebagai tantangan terhadap kekuasaannya sendiri. Spekulasi yang lain menyatakan bahwa ia dipengaruhi oleh Uskup Baucau, Monsignor Nasciminto. Apapun alasannya, faktanya adalah ia telah merintangi mobilisasi milisi baru, setidaknya untuk sementara.

Bupati Manufahi juga tampak secara serupa berdampak meredakan terhadap kekerasan milisi di wilayahnya. Walaupun ia berdinan sebagai seorang pejabat pemerintah Indonesia, Nazario José Tilman de Andrade dianggap sebagai orang moderat dan bahkan bersimpati pada kemerdekaan. Lebih jauh lagi, ada tanda-tanda pertentangan di antara dirinya dengan pimpinan milisi Ablai. Mungkin ketiadaan dukungan bupati kepada Ablai mengakibatkan lemahnya kelompok milisi ini, dan membuat tingkat kekerasan yang dilakukan oleh para anggotanya relatif rendah pada 1999.

Penjelasan yang ketiga dan yang berkaitan mengenai persebaran geografis kekerasan yang tidak merata pada 1999 adalah bahwa kabupaten-kabupaten di barat memiliki jaringan pialang kekuasaan pro-Indonesia yang andal jauh sebelum 1999. Konsentrasi para bos pro-Indonesia di kabupaten bagian barat memiliki akar historis yang dalam. Dalam paruh akhir abad ke-19, penguasa Portugis di Timor-Leste memandang kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah perbatasan sebagai tidak bisa diatur, membangkang, dan liar, dan menjadikan kerajaan-kerajaan itu sebagai pusat perhatian dari berbagai serangan penaklukan yang berulang kali.* Ketika kekuasaan Portugis mulai runtuh pada 1974-1975, banyak dari keluarga setempat yang berkuasa di kawasan tersebut melihat satu kesempatan untuk membebaskan diri dari mereka, dan memilih mendukung invasi serta aneksasi Indonesia.

Jaringan pro-Indonesia yang sudah dibangun lama itu diandalkan untuk memobilisasi kekuatan milisi besar dalam jangka waktu yang relatif singkat. Contoh kasusnya adalah João Tavares, orang yang pada 1999 dijadikan Panglima Tertinggi dari Pasukan Pejuang Integrasi (PPI). Tavares mendapatkan kedudukannya karena berjuang di pihak Indonesia sejak 1975. Ia diberi penghargaan karena loyalitasnya kepada pemerintah Indonesia, dengan ditunjuk sebagai Bupati Bobonaro selama dua kali masa jabatan.† Ia juga berhasil menumpuk penguasaan tanah yang besar, yang

* Mengenai reputasi wilayah barat akan keliarannya, lihat Katherine Davidson, *The Portuguese Colonisation of Timor: The Final Stage, 1850-1912*, Tesis Ph. D, University of New South Wales, 1994, halaman 74, 101, 170, dan 181.

† Tavares ditunjuk menjadi Bupati Bobonaro pada 1978 dan menduduki jabatan itu selama sepuluh tahun kemudian. Dunn menulis bahwa setelah 'integrasi' resmi Timor Timur pada 1976, "... orang-orang Timor tepercaya, seperti João Tavares dan Tomás Gonçalves ditunjuk menjadi bupati." Dunn, *Timor: A Nation Betrayed*, halaman 266.

menjadikannya salah satu tuan tanah paling besar di Timor-Leste, setelah Presiden Soeharto dan sejumlah kroninya. Jadi, pada 1999, Tavares telah lama menjadi operator lokal yang amat berkuasa, dan ia hanyalah salah satu dari beberapa orang di kabupaten-kabupaten bagian barat yang dapat diandalkan untuk mengorganisasi milisi dan kegiatan pro-otonomi.

Sebaliknya, kabupaten-kabupaten di bagian tengah dan timur memiliki jaringan bos pro-Indonesia yang kurang kuat. Sebagian karena secara umum kabupaten-kabupaten ini lebih miskin daripada yang di bagian barat, dan karenanya mungkin kurang kondusif bagi kemunculan para pialang kekuasaan yang makmur dan berkuasa. Yang juga penting, kabupaten-kabupaten di bagian tengah dan timur secara historis merupakan wilayah basis yang penting bagi perlawanan Fretilin dan Falintil. Beberapa kepala desa di kabupaten-kabupaten ini, bahkan beberapa bupati, bersimpati atau setidaknya tidak bermusuhan dengan Fretilin, walaupun mereka tidak menunjukkan hal ini secara terbuka. Keadaan itu sungguh-sungguh membatasi rombongan orang yang mungkin bergabung dengan milisi atau memimpinya.

Jadi, secara paradoks, pola geografis persebaran kekerasan milisi yang tidak merata ini tidak mendukung klaim bahwa kekerasan tersebut bersifat spontan. Lebih daripada itu, pola tersebut memperkuat bukti lain bahwa kekerasan tersebut bersifat sistematis dan secara krusial bertumpu pada hubungan antara pasukan-pasukan milisi dengan pihak-pihak berwenang Indonesia. Lebih tepatnya, konsentrasi kekerasan di kabupaten-kabupaten bagian barat Timor-Leste berhubungan dengan tiga faktor utama: kedekatan geografis dengan Indonesia; sikap dan latar belakang karier dari para pejabat kabupaten dan tingkat lebih rendah; dan lokasi jaringan pro-Indonesia yang sudah terkondisikan secara historis.

Ringkasnya, bab ini mengemukakan bahwa pola-pola yang bisa dilihat dalam karakter dan persebaran kekerasan di Timor-Leste menunjukkan bahwa kekerasan itu tidaklah spontan, melainkan lebih bersifat sistematis dan direncanakan oleh pihak-pihak berwenang Indonesia. Empat pola yang menonjol mengarah pada kesimpulan tersebut.

Pertama, terdapat variasi sistematis dalam jumlah dan bobot kekerasan yang terjadi sepanjang waktu. Bisa dibedakan tiga periode umum, yang masing-masing memiliki ciri-cirinya sendiri, sebagai berikut: (i) periode pra-UNAMET (Januari hingga akhir Mei); (ii) periode UNAMET (awal Juni hingga 30 Agustus); dan periode setelah pemungutan suara (30 Agustus hingga akhir Oktober). Kekerasan menurun dan meningkat selaras dengan kebutuhan dan kepentingan politik pihak-pihak berwenang Indonesia, dan ada bukti tidak langsung maupun dokumenter bahwa keragaman tersebut merupakan masalah kebijakan resmi.

Kedua, terdapat kegagalan terus-menerus dari Polri, dan pihak-pihak berwenang lain yang bertanggung jawab, untuk mengambil tindakan efektif terhadap para pelaku kekerasan. Konsistensi dari ketidakbertindakan semacam ini, dan pola impunitas yang turut dilahirkan oleh tindakan itu, tampak mencerminkan suatu kebijakan yang keputusannya diambil pada tingkat tinggi.

Ketiga, terdapat kesamaan yang menonjol dalam *modus operandi* milisi di seluruh wilayah Timor-Leste. Konsistensinya dengan gaya dan perilaku tertentu yang telah terlihat di berbagai tempat yang berbeda di Timor-Leste, menunjukkan dengan kuat bahwa kekerasan dikoordinasikan setidaknya pada tingkat Komando Resor Militer (Korem), dan mungkin pada tingkat yang lebih tinggi.

Terakhir, walaupun terdapat kesamaan luas perilaku kekerasan di seluruh Timor-Leste, terdapat variasi geografis yang signifikan dalam hal intensitas dan banyaknya kekerasan. Variasinya bersifat sistematis dan konsisten dengan bukti lain tentang perencanaan keseluruhan oleh pihak berwenang Indonesia.

Enam Dokumen Kunci

Sejak awal 1999, terungkap sejumlah dokumen yang digambarkan sebagai bukti dari perencanaan tingkat tinggi TNI untuk kekerasan baik sebelum dan setelah pemungutan suara 30 Agustus. Bukti tersebut perlu diperiksa dengan hati-hati karena mungkin penting sekali untuk menetapkan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban politik dan hukum atas kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste.

Khususnya enam dokumen pantas diperiksa dengan sangat seksama karena klaim-klaim yang dibuat atas namanya. Dokumen-dokumen itu adalah: satu memorandum rahasia dari seorang pemimpin milisi yang menjelaskan rencana untuk melaksanakan sebuah operasi terhadap para pendukung kemerdekaan; sepucuk surat edaran yang diduga dikeluarkan oleh panglima tertinggi milisi, João Tavares; satu laporan rahasia yang disusun oleh seorang pejabat tinggi pemerintah, H.R. Garnadi; satu lembar telegram yang menyampaikan garis besar rencana untuk memobilisasi satu kesatuan militer khusus setelah pemungutan suara; satu rencana Polri untuk melakukan evakuasi besar-besaran setelah pemungutan suara, yang disebut 'Operasi Hanoin Lorosae II'; dan satu rencana operasi TNI untuk Konsultasi Rakyat dan evakuasi, yang disebut 'Operasi Wira Dharma-99.'

Operasi Pembersihan

Dokumen pertama yang diajukan sebagai bukti mengenai perencanaan tingkat tinggi untuk kekerasan adalah satu memorandum bertanggal 11 Maret 1999, yang ditujukan kepada panglima tertinggi milisi, João Tavares, dan para pemimpin milisi lainnya.* Memo yang dikeluarkan oleh komandan milisi Darah Merah, Lafaek Saburai, ini memberitahukan rencana untuk memulai 'Operasi

* Surat dari Lafaek Saburai kepada João da Silva Tavares, (No.024/Ops/R/III/1999) tentang "Operasi Pembersihan," 11 Maret 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #15). Terjemahan bahasa Inggris dari dokumen ini dilampirkan pada laporan East Timor Action Network "Subject: *Operasi Sapu Jagad* – Indonesia's military plan to disrupt independence," Ref. Doc. FAIO-1999/10/21.

Pembersihan' pada 1 Mei 1999 pukul 00.00. Menurut dokumen ini, operasi akan "menghapus keberadaan" para pemimpin dan kader kelompok prokemerdekaan, dengan pertama-tama memindahkan seluruh penduduk pro-Indonesia dari Dili ke Kabupaten Bobonaro dan kemudian membunuh semua orang yang tetap berada di Dili pada tanggal yang ditentukan itu.

Ketika dokumen ini pertama kali terungkap di awal 1999, sebagian analis dengan cepat menyimpulkan bahwa dokumen ini membuktikan keberadaan suatu rencana sentral intelijen militer Indonesia untuk mengacaukan referendum melalui kekerasan dan intimidasi milisi. Tidak lama kemudian, para pengamat dan analis lain menerima kesimpulan ini dan mulai berbicara dan menulis dengan penuh keyakinan tentang 'Operasi Pembersihan' sebagai rencana TNI untuk merongrong referendum.' Misalnya organisasi East Timor Action Network (ETAN) menulis bahwa "pelaksanaan rencana [untuk mengacaukan pemungutan suara] itu dimulai segera setelah Presiden Habibie menawarkan pilihan otonomi luas pada Agustus 1998, dan ini muncul secara resmi pada Maret 1999 dengan nama sandi Operasi Sapu Jagad."[†]

Untuk mendukung pendapat ini, para analis mencatat bahwa penulis dokumen 'Operasi Pembersihan', Lafaek Saburai (yang juga dikenal dengan nama Afonso Pinto) diketahui memiliki hubungan dengan BIA (Badan Intelijen ABRI) yang sampai dengan Januari dipimpin oleh Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim. ETAN menulis bahwa oleh karena hubungan Saburai dengan BIA, "dapat ditarik kesimpulan mengenai dari mana perintah itu berasal."[‡]

Kesimpulan itu mungkin benar, tetapi ada sejumlah alasan untuk berhati-hati dalam menerima cara pembacaan dokumen seperti itu. Salah satunya, latar belakang Saburai sebagai agen BIA tidak dengan sendirinya merupakan bukti bahwa 'Operasi Pembersihan' yang diancamkannya merupakan satu rencana TNI atau BIA, dan ada alasan-alasan untuk meragukannya. Sebagaimana yang terungkap dalam beberapa kejadian kemudian, kelompok milisinya, Darah Merah, adalah kelompok yang amat lokal dan samasekali tidak termasuk kelompok yang paling berpengaruh atau kuat di Timor-Leste.[§] Apabila dibandingkan dengan kelompok Aitarak di Dili, Besi Merah Putih di Liquiçá, atau Mahidi di Ainaro, kelompok Darah Merah adalah kelompok yang kecil dan tidak berarti. Orang dapat bertanya mengapa demikian kalau Saburai dan Darah Merah benar-benar merupakan saluran utama dari suatu rencana sentral BIA.

* Argumen ini tampaknya muncul pertama kali dalam buletin Indonesian Human Rights Campaign (Tapol), "The Indonesian Army's 'dirty war' in East Timor," *Tapol Bulletin*, Juni 1999.

† East Timor Action Network (ETAN), "Subject: 'Operasi Sapu Jagad' - Indonesia's military plan to disrupt independence." (Ref doc. FAIO-1999/10/21).

‡ ETAN, "Operasi Sapu Jagad."

§ Darah Merah menurut laporan dibentuk pada 21 Maret 1999. East Timor International Support Center (ETISC), "Indonesia's Death Squads: Getting Away with Murders," ETISC Occasional Paper No. 2 (Darwin, Mei 1999), halaman 18.

Nilai dari dokumen ‘Operasi Pembersihan’ sebagai bukti dari satu operasi militer utama yang terencana juga berkurang dengan adanya fakta bahwa operasi yang disebut dalam dokumen tersebut tidak pernah benar-benar terjadi. Tanggal 1 Mei tiba dan berlalu tanpa adanya tanda-tanda pembersihan massal sebagaimana yang dijanjikan dalam surat tersebut.

Pendeknya, TNI mungkin telah memiliki suatu rencana untuk meneror penduduk dan memengaruhi hasil pemungutan suara, tetapi dokumen ‘Operasi Pembersihan’ tidak memberikan bukti yang meyakinkan tentang operasi tersebut. Sebaliknya, dokumen ini tampak seperti hasil karya dari seorang komandan milisi tingkat lokal yang agak terlalu bersemangat, yang membesar-besarkan keinginannya kepada sesama komandan milisi dan kepada perwira TNI yang mungkin mendengarkan.

Namun jika dokumen ‘Operasi Pembersihan’ tidak membuktikan adanya suatu perencanaan tingkat tinggi untuk kekerasan oleh intelijen militer Indonesia, dokumen ini memberikan bukti tambahan tentang hakikat hubungan antara milisi dan pihak berwenang Indonesia. Dokumen ini menunjukkan, misalnya, bahwa kelompok-kelompok milisi setidaknya menginginkan koordinasi luas dengan TNI. Dokumen ini juga mengungkapkan sejauh mana retorika teror, satu ciri dari strategi kontrapemberontakan TNI sendiri, telah menjadi ciri standar gaya milisi di awal 1999.

Dokumen Tavares

Dokumen kedua yang sering dikutip sebagai bukti bahwa kekerasan sebelum dan sesudah pemungutan suara direncanakan pada tingkat tinggi adalah satu instruksi, bertanggal 17 Juli 1999, yang diduga ditandatangani oleh pemimpin tertinggi milisi Timor-Leste—secara resmi dikenal sebagai ‘Panglima Pasukan Pejuang Integrasi’—João da Silva Tavares. Instruksi sepanjang dua halaman ini ditujukan kepada para komandan utama milisi di Timor-Leste, dan ditembuskan kepada berbagai perwira militer dan Polri, termasuk Panglima TNI Jenderal Wiranto dan Panglima Kodam IX, Mayor Jenderal Adam Damiri.

Dengan keterusterangan yang mengejutkan, instruksi Tavares mengarahkan semua komandan milisi untuk: “Tetap mengadakan teror dan intimidasi terhadap pihak-pihak yang disinyalir memengaruhi rakyat untuk tidak menerima Otonomi Khusus” dan mendesak mereka untuk “Menekan dan mengancam rakyat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam kampanye yang dilakukan oleh Juru Kamp. Pro-Kemerdekaan...” Instruksi ini juga menjanjikan bahwa pihak berwenang Indonesia akan memberikan dukungan material yang besar kepada milisi. “Sebelum hasil jajak pendapat diumumkan,” dokumen itu menyebutkan:

.....
* “Instruksi Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Tentang Kesiapan dan Kesiagaan Pasukan Pejuang Integrasi (Milisi) Dalam Menyikapi Perkembangan Situasi dan Kondisi di Timor Timur,” (No.020/INS/PPI/VII/1999). Salinan dari dokumen ini, dan terjemahannya dalam Bahasa Inggris yang dibuat oleh UN-AMET, dimiliki oleh penulis.

“... akan dibagikan senjata-senjata modern yang telah disiapkan oleh ABRI sebanyak 15.000 (lima belas ribu) pucuk, serta akan didukung oleh Pasukan elite TNI dan dilengkapi dengan senjata berat/Tank serta Pesawat-Pesawat tempur modern sebanyak 50 (lima puluh) buah Pada saat Pengumuman hasil Konsultasi Rakyat, ternyata Pihak Pro-Otonomi dinyatakan kalah maka secara serentak dengan kekuatan penuh melancarkan Operasi Pembersihan terhadap pendukung-pendukung prokemerdekaan mulai dari yang berusia 15 Tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan tidak terkecuali.”

Dokumen ini muncul pertama kali di awal Agustus 1999 dan segera ditangkap oleh para pengamat sebagai bukti kerjasama TNI-milisi dalam merancang kekerasan di seluruh Timor-Leste.[†] Kepala Misi UNAMET meminta pendapat stafnya tentang dokumen ini. Polisi Sipil PBB (UN Civpol) berkonsultasi dengan rekannya dari Polri yang dengan cepat menyimpulkan, atas dasar teknis, bahwa dokumen tersebut palsu. Kantor Urusan Politik UNAMET juga meragukan keaslian dokumen tersebut, namun lebih berdasarkan pada analisis politik, daripada analisis teknis atau forensik.

Salah satunya, Kantor Urusan Politik memperhatikan bahwa sejumlah salinan dari dokumen tersebut telah dikirimkan ke UNAMET dalam jangka waktu hanya beberapa hari. Ini sangat tidak biasa, khususnya untuk dokumen yang sesensitif itu, dan ini membuat para analis mencurigai keasliannya. Bagaimana dan mengapa begitu banyak salinan untuk dokumen semacam itu begitu cepat tersedia? Perhatian juga ditujukan pada penggunaan istilah ‘Milisi’ dalam judul dokumen, satu istilah yang ditolak oleh pemerintah Indonesia dan para pemimpin kelompok prointegrasi. Mengapa Panglima Pasukan Pejuang Integrasi menggunakan istilah tersebut?

Analisis dari Kantor Urusan Politik UNAMET berpendapat bahwa ada dua kemungkinan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah bahwa dokumen tersebut dibuat sebagai bagian dari perang psikologis yang dirancang oleh kubu pro-Indonesia untuk menyebarkan ketakutan di kalangan pendukung prokemerdekaan. Kemungkinan kedua adalah bahwa dokumen tersebut diciptakan oleh pihak prokemerdekaan untuk mendiskreditkan TNI dan milisi dengan satu pukulan dokumenter yang memuaskan, dan pada saat yang kritis di dalam prosesnya.

Isi dari dokumen ini menimbulkan kecurigaan. Bahasa yang digunakan dalam instruksi terlalu baik dan teratur dalam menyampaikan berbagai ancaman dan klaim-klaim kasar di dalamnya, sehingga tidak meyakinkan. Bahkan jika pada waktu tertentu João Tavares mengeluarkan sebagian atau semua perintah dan janji

.....
* “Instruksi Panglima Pasukan Pajuang Integrasi Tentang Kesiapan dan Kesiagaan Pasukan Pejuang Integrasi (Milisi).”

† Beberapa salinan dari dokumen ini sampai ke tangan UNAMET dalam waktu yang hampir bersamaan, bersama dengan sepucuk surat yang ditujukan kepada Wakil Sekretaris Front Politik Internal (*Frente Política Interna* – FPI) CNRT bertanggal 3 Agustus 1999.

seperti yang dikemukakan dalam dokumen ini, sangat tidak mungkin bahwa ia akan mengatakannya secara tertulis.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Kantor Urusan Politik menyimpulkan bahwa dokumen Tavares bertanggal 17 Juli sangat mungkin bukan dokumen asli. Bukan berarti bahwa UNAMET menganggap Tavares dan pemimpin milisi yang lain tidak bersalah melakukan pelanggaran, atau bahwa UNAMET meragukan keterlibatan TNI dalam kekerasan. Sebaliknya, UNAMET tetap yakin bahwa TNI dan milisi bekerjasama sangat erat. Kesimpulan ini sekadar menyatakan bahwa UNAMET tidak menganggap dokumen Tavares sebagai bukti yang meyakinkan untuk fakta kerjasama TNI dan milisi.

Dokumen Garnadi

Dokumen ketiga, yang muncul di Dili pertengahan Juli 1999, sangat mungkin merupakan dokumen yang otentik—tetapi seperti dokumen-dokumen lain yang sudah dibahas, dokumen ini tidak dengan sendirinya membuktikan semua hal sebagaimana yang dianggap oleh sementara pengamat. Dokumen ini dikenal dengan sebutan dokumen Garnadi, yang oleh banyak orang dianggap sebagai satu bukti yang tidak bisa dibantah, yang membuktikan sekaligus adanya suatu hubungan resmi yang erat antara pemerintah dengan milisi, dan bahwa kekerasan setelah pemungutan suara direncanakan pada tingkat yang paling tinggi—yaitu di Jakarta.

Laporan ini bertanggal 3 Juli 1999, dan diberi judul “Gambaran Umum Apabila Opsi I Gagal,” memberikan suatu penilaian yang terus-terang tentang strategi pemerintah dalam menghadapi proses Konsultasi Rakyat yang dimulai awal Juli; ‘Opsi I’ adalah tawaran ‘Otonomi Khusus’ yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Penulisnya, Mayor Jenderal (Purn.) H.R. Garnadi, adalah Asisten I Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung. Fakta bahwa laporan ini ditulis oleh seorang pejabat penting pemerintah dan dikirimkan kepada seorang menteri senior dan mantan jenderal TNI, memberikan signifikansi yang luarbiasa pada dokumen tersebut. Karenanya dokumen ini tampaknya berkemungkinan membuktikan keterlibatan pemerintah pusat dan TNI dalam kekerasan di Timor-Leste.

Para analis menyatakan bahwa dokumen ini berbicara tentang tugas pemerintah untuk melindungi dan mendukung milisi antikemerdekaan, yang digambarkan sebagai “pahlawan integrasi.” Bagian yang relevan tertulis seperti berikut ini: “Tidak bisa diabaikan bagaimana sikap para Milsas asal Timor Timur yang direkrut dari pendukung integrasi. Mereka adalah pahlawan integrasi.” Yang lebih mengejutkan lagi, laporan-laporan media dan para analis mengklaim bahwa dokumen ini berbicara tentang satu rencana pemerintah pusat untuk menghancurkan Timor-Leste pada

.....
* H.R. Garnadi, “Gambaran Umum Apabila Opsi I gagal,” satu laporan rahasia kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, 3 Juli 1999. (Koleksi Yayasan HAK, Doc #35). Terjemahan dokumen ini dalam bahasa Inggris terdapat di dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book on Political Affairs and Human Rights in East Timor*, Dili, November 1999.

saat hasil pemungutan suara memperlihatkan kemenangan prokemerdekaan. Kata-kata penting mengenai hal ini menyatakan bahwa “Merencanakan dan pengamanan rute pengunduran, kalau mungkin merusak fasilitas-fasilitas atau objek vital.”

Fakta bahwa Timor-Leste benar-benar dihancurkan setelah pemungutan suara memberikan bobot kepercayaan pada klaim bahwa laporan Garnadi menyampaikan suatu rencana ‘pembumihangusan.’ Namun suatu penyelidikan yang lebih teliti terhadap dokumen tersebut mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak demikian. Apabila dibaca dalam konteks, maka bagian tentang penghancuran yang dikutip di atas tidak memberikan bukti tentang suatu kebijakan pembumihangusan pada tahap ini. Kenyataannya, tekanan utama Garnadi di dalam laporan ini adalah bahwa, dalam keyakinannya akan kemenangan, pemerintah Indonesia gagal merencanakan sesuatu untuk menghadapi kemungkinan kekalahan, dan bahwa lebih baik memulai perencanaan itu tanpa menunda lagi. Misalnya, ia menulis:

“... kita hanya mempunyai waktu untuk memenangkan Otonomi Khusus selama \pm 6 minggu lagi, namun bila ini gagal, waktu yang 6 minggu itu sangatlah singkat untuk membuat rencana penyelamatan personel prointegrasi beserta aset-aset lainnya. Karenanya penyusunan Rencana Kontinjensi menghadapi Opsi II sudah harus dikembangkan sedini mungkin. Pemerintah masih harus menyisakan anggaran untuk mendukung rencana cadangan ini.”[†]

Komentarnya bahwa infrastruktur vital kalau mungkin dirusak oleh tentara Indonesia yang berangkat di saat kekalahan Otonomi Khusus ditawarkan sebagai salah satu dari beberapa usulan untuk mengembangkan suatu rencana darurat. Tetapi, ini bukanlah ungkapan tentang kebijakan yang sudah disetujui pada saat itu. Justru apa yang ditunjukkan oleh dokumen tersebut dengan sangat jelas adalah bahwa, pada awal Juli, rencana darurat dan operasi untuk menghadapi kemenangan prokemerdekaan belum benar-benar dimulai.

Pendeknya, dokumen Garnadi itu sendiri tidaklah mengungkapkan tingkat keterlibatan pemerintah di dalam perencanaan kekerasan seperti yang dinyatakan oleh sementara pihak. Walaupun demikian, sebagaimana yang telah dinyatakan di bagian lain dalam laporan ini, dokumen tersebut memperjelas aspek-aspek penting dari hubungan antara pihak berwenang Indonesia dengan milisi, dan sikap resmi pemerintah terhadap milisi. Dokumen ini menegaskan adanya dukungan resmi pemerintah, dan solidaritas dengan, kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia, serta usulan yang kuat bahwa mereka harus diperhatikan pada saat kemenangan prokemerdekaan. Dokumen ini juga membuktikan bahwa para perwira tinggi di Dili dan Jakarta sekurangnya sedang mempertimbangkan dan membahas penghancuran

* Garnadi, “Gambaran Umum Apabila Opsi I Gagal,” paragraf 8b.

† Garnadi, “Gambaran Umum Apabila Opsi I Gagal,” paragraf 8b. Dalam paragraf 8b Garnadi juga menulis bahwa “Membuat rencana cadangan (Rencana Kontinjensi) untuk menghadapi situasi apabila Opsi I tidak diterima.” Dalam hal penganggaran, CNRT mengklaim di awal Agustus 1999 bahwa Jakarta telah menyediakan Rp 28 juta untuk rencana evakuasi.

Timor-Leste kalau opsi otonomi kalah, saat masih di Juli. Dan dokumen ini menegaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, sangat terlibat di dalam pembahasan-pembahasan tersebut yang berkembang setelah 3 Juli 1999.

Telegram Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur

Dokumen keempat yang tampak menunjukkan perencanaan TNI adalah satu telegram rahasia yang tampaknya berasal dari militer, tertanggal 29 Agustus 1999, atau hanya satu hari sebelum pemungutan suara. Telegram ini ditujukan kepada banyak perwira TNI, termasuk Komandan Korem 164 dan Komandan Batalion 744, dengan tembusan disampaikan kepada pemimpin tertinggi milisi, João Tavares, dan berbagai perwira intelijen TNI.

Telegram ini ditandatangani oleh Sersan Henrike Agama, Wakil Komandan Komando Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur.[†] Dokumen ini menginstruksikan kepada semua penerima telegram yang disebutkan namanya berikut anakbuah mereka agar bersiap melapor di hari-hari setelah pemungutan suara dan pengumuman hasilnya. Pesannya patut dikutip secara terperinci:

“B. Sehubungan ref di atas, mohon para komandan tersebut agar mengizinkan personelnnya masing-masing yang terlibat dalam pasukan Brigade Partisan Dili untuk dapat mengikuti apel kesiapan di Asrama Seroja di Comoro, Dili yang diatur sebagai berikut:

1. Hari Senin s/d Kamis pukul 14.30 sampai selesai.
2. Hari Jumat dan Sabtu pukul 13.30 sampai selesai
3. Hari Minggu pukul 11.00 WITA.

C. Koordinasi:

1. Markas Komando Brigade/Markas Komando Batalion Partisan-1 Dili berada di Asrama Seroja Comoro Dili.
2. Para komandan kesatuan dapat melaksanakan cros cek terhadap kehadiran anggotanya melalui Kepala Seksi Operasi Brigade Penyelamat Integrasi di markas.”[‡]

Telegram ini tampak menunjukkan keberadaan komando militer khusus—‘Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur’ dan satu kesatuan di Dili dari komando tersebut, yaitu ‘Batalion Partisan Dili’—yang terdiri atas prajurit-prajurit reguler yang berasal dari kesatuan-kesatuan normal TNI, dan dikomandoi oleh perwira-perwira TNI.[‡]

.....
^{*} Komando Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur atau Brigade P.I. Tims.

[†] Telegram, bertanggal 29 Agustus 1999, ditandatangani oleh Wakil Komandan Brigade Penyelamat Integrasi Timor Timur, Sersan Henrike Agama. Salinan dokumen ini dimiliki oleh penulis.

[‡] Juga mungkin bahwa kesatuan-kesatuan ini mencakup pasukan bukan reguler, termasuk milisi. Sepucuk surat bertanggal 23 Agustus 1999, dari Cancio Lopes da Carvalho (Komandan milisi Mahidi dan Komandan PPI Sektor C) kepada Jenderal Wiranto, Mayor Jenderal Adam Damiri, dan Kolonel Noer Muis, mengusulkan pembentukan “Batalion Partisan” di seluruh Timor-Leste (Koleksi SCU, Doc #222).

Setidaknya, dokumen ini memperjelas bahwa markas kesatuan-kesatuan ini bertempat di satu fasilitas TNI, yaitu Asrama Seroja di Comoro, Dili. Dengan kata lain, tampaknya ini adalah kesatuan-kesatuan militer yang resmi, yang sedang dipersiapkan untuk tindakan atas nama integrasi pada hari-hari segera setelah pemungutan suara.

Sepucuk surat dari Front Politik Internal (FPI) CNRT yang dikirimkan kepada Kantor Urusan Politik UNAMET pada 1 September, bersama dengan salinan telegram ini, memberikan informasi tambahan tentang rencana-rencana tersebut yang dilaporkan didapatkan dari seorang sumber di dalam Korem Timor Timur.[†] Surat itu menjelaskan bahwa Brigade yang disebutkan dalam telegram tersebut baru saja dibentuk oleh TNI—dengan bantuan beberapa tokoh sipil penting termasuk Bupati Dili—untuk mengambil tindakan represif terhadap tokoh-tokoh prokemerdekaan pada saat kemenangan kemerdekaan. Secara lebih khusus, dikatakan bahwa kesatuan itu telah ditugaskan untuk melaksanakan “operasi penculikan semua aktivis prokemerdekaan, seperti [operasi] pada waktu G30S/PKI di Indonesia.” Akhirnya, surat itu melaporkan bahwa pada 31 Agustus, Komandan Korem telah memimpin pembagian 600 pucuk senjata kepada milisi, dan bahwa 800 pucuk senjata lagi akan dibagikan dalam waktu dekat.

Fakta bahwa tindakan represif memang dilakukan dengan bantuan TNI setelah hasil pemungutan suara diumumkan pada 4 September mengharuskan kita untuk memperhatikan surat CNRT secara serius. Apabila diamati bersama, telegram 30 Agustus dan surat CNRT tampak memberikan beberapa bukti dokumenter bahwa kekerasan dan represi setelah pemungutan suara sebenarnya dilakukan dengan sepengetahuan penuh TNI, setidaknya sampai tingkat Korem, dan kemungkinan direncanakan oleh perwira-perwira TNI.

Namun, sekali lagi, perlu untuk berhati-hati. Telegram tersebut boleh jadi hanya membuktikan bahwa TNI—atau suatu bagian dari TNI—sedang melakukan persiapan menghadapi kemungkinan kekacauan setelah pemungutan suara; yang dalam keadaan waktu itu bukan merupakan tindakan yang tidak berdasar.

Operasi Cabut

Ambiguitas yang sama menandai dua dokumen yang menguraikan secara ringkas rencana-rencana TNI dan Polri untuk melakukan evakuasi setelah pemungutan suara. Rencana-rencana ini meliputi satu rencana yang dibuat oleh Komando Resor Militer Timor Timur pada Juli 1999, dengan nama ‘Operasi Wira Dharma-99’, dan satu rencana Polri yang disusun pada Agustus yang disebut ‘Operasi Hanoin Lorosae II.’[†]

.....
* Surat dari CNRT, Front Politik Internal, Sekretariat Komando Wilayah 4 kepada Political Section, UNAMET, bertanggal 1 September 1999. Salinan dokumen ini dimiliki oleh penulis.

† Korem 164/WD, “Rencana Operasi Wira Dharma-99,” Dili, Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #33); dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Timor Timur, “Rencana Operasi Hanoin Lorosae II,” No. Pol: Ren Ops/04/VIII/1999, Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).

Kedua dokumen ini tampak telah dipersiapkan sesuai dengan rencana operasi Kodam IX untuk evakuasi setelah pemungutan suara, yang diketahui sebagai 'Operasi Cabut' dan sejalan dengan keseluruhan 'Rencana Kontinjensi 1999-2000', yang disusun di markas besar TNI di Jakarta.⁴ Walaupun kami belum mendapatkan salinan dari dua dokumen terakhir ini, kami mengetahui beberapa hal mengenai.† 'Operasi Cabut' dipersiapkan sesuai dengan surat perintah tertanggal 5 Mei 1999 dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, kepada Panglima Kodam IX, Mayor Jenderal Adam Damiri. Dalam perintah 5 Mei tersebut, Subagyo memerintahkan Damiri menyusun satu rencana untuk "pemindahan ke belakang/pengungsian apabila Opsi Kedua [kemerdekaan] menjadi pilihan."[‡] Rencana itu disusun pada Juli dan digerakkan di awal September 1999.[§] Sedang 'Rencana Kontinjensi 1999-2000' tercatat dipersiapkan atas perintah Jenderal Wiranto oleh Mayor Jenderal Endriartono Sutarto, Asisten Operasi Kepala Staf Umum TNI. Dokumen 13 halaman itu memaparkan dengan begitu tepat apa yang benar-benar terjadi pada hari-hari dan minggu-minggu setelah pemungutan suara.[¶]

Dua dokumen yang kami miliki (baik sebagian maupun seluruhnya) menguraikan rencana untuk pemindahan besar-besaran setelah pemungutan suara, yang sangat sesuai dengan pemindahan yang benar-benar dilaksanakan pada September 1999. Mereka yang dijadikan sasaran pemindahan menurut rencana, misalnya, termasuk sekitar 180.000 orang Timor-Leste, dan sekitar 70.000 orang pegawai negeri sipil Indonesia, tentara, dan polisi, berikut keluarganya.^{**} Jumlah seluruhnya orang yang dipindahkan yang disebutkan kedua rencana tersebut adalah sekitar 250.000 orang atau hampir tepat sama dengan jumlah yang dalam

* Dalam beberapa dokumen TNI, Rencana Kontinjensi ini disebut "Rencana Tindakan Menghadapi Kontinjensi Purna Penentuan Pendapat di Timtim [Jika] Opsi-1 Gagal." Lihat: "Direktif Panglima TNI, Nomor: 02/P/IX/1999, tentang Komando Penguasa Darurat Militer Wilayah Timor Timur," [8] September 1999 (Koleksi HRU, Doc. TNI #9).

† Pada 31 Agustus 1999, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo Hadisiswoyo mengatakan bahwa TNI telah mempersiapkan sebuah rencana kontinjensi untuk menghadapi segala kemungkinan di Timor Timur. Embassy of Japan, "Political News Round Up," 31 Agustus 1999. Pada Januari 2000, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim lebih jauh memperjelas bahwa "Markas besar TNI ... telah mempersiapkan sebuah rencana kontinjensi sementara Pangdam Udayana membuat sebuah rencana operasi." Lihat *Jakarta Post*, 5 Januari 2000. 'Operasi Cabut' dan 'Rencana Kontinjensi 1999-2000' disebutkan secara eksplisit dalam satu surat perintah (No. Sprin/811/VII/1999) yang dikeluarkan oleh Brigadir Jenderal Simbolon, Kepala Staf Kodam IX, pada tanggal 14 Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK).

‡ Telegram rahasia (No. STR/172/1999) dari Kepala Staf Angkatan Darat (ditandatangani oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Johny J. Lumintang) kepada Pangdam IX Udayana, 5 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #21).

§ Dalam satu telegram rahasia dari awal bulan September, Dandim Dili, Letnan Kolonel Soedjarwo, menginformasikan kepada Danrem, Kolonel Noer Muis, bahwa 'Operasi Cabut' secara resmi telah dimulai di Kabupaten Dili pada pukul 15.00 tanggal 6 September 1999 (Koleksi Yayasan HAK).

¶ Greenlees dan Garran, *Deliverance*, halaman 209.

** Satu lampiran (tentang kebutuhan logistik) untuk 'Operasi Wira Dharma 99' TNI memperkirakan jumlah total orang yang membutuhkan evakuasi adalah 251.187 orang yang dirinci sebagai berikut: Personel militer dan keluarganya (26.015 jiwa), Orang dari luar Timor Timur (43.347 jiwa), Orang Timor Timur (180.000). Lihat: Korem 164/WD, "Operasi Wira Dharma 99," Lampiran D (Rencana Banmin), Sub-Lampiran-3 (Kebutuhan Angkutan)," Dili, Juli 1999, tanpa tanggal, (Koleksi Yayasan HAK, Doc #33).

kenyataannya dipindahkan. Dokumen Polri juga menyertakan penilaian intelijen yang memperkirakan terjadinya penghancuran dan kekerasan yang luas di saat prokemerdekaan menang.

Setidaknya seorang analis yang telah memeriksa dokumen-dokumen ini menyimpulkan bahwa "... militer tidak pernah merencanakan 'pengalihan kekuasaan secara damai dan tertib ...' sebagaimana ditetapkan dalam Kesepakatan 5 Mei. Mereka secara rahasia berencana untuk kekacauan." Analisis ini secara mendasar benar, dan fakta terkutuknya adalah bahwa pihak-pihak berwenang Indonesia bersikap tidak jujur dalam meyakinkan komunitas internasional bahwa mereka akan tetap berada di Timor-Leste dan memelihara keamanan di sana, apapun hasil pemungutan suara. Lebih jauh lagi, kebenaran analisis tersebut dikukuhkan sebagian oleh pernyataan-pernyataan di depan umum dan pribadi pejabat-pejabat tinggi Indonesia dalam minggu-minggu sebelum pemungutan suara. Pada Agustus 1999, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim dan Kolonel Noer Muis mengatakan kepada UNAMET tentang persiapan resmi untuk evakuasi besar-besaran setelah pemungutan suara. Kolonel Muis yang bersama Menteri Kehakiman dan Sekretaris Negara, Muladi, juga dikutip oleh pers mengenai hal tersebut. Muladi dilaporkan menyatakan tentang "kemungkinan besar" perpindahan sejumlah 223.000 orang kalau prokemerdekaan menang.[†]

Tetapi, persoalannya tetap apakah dokumen-dokumen yang dipersoalkan tersebut membuktikan bahwa kekerasan yang telah terjadi setelah pemungutan suara direncanakan oleh pimpinan TNI dan/atau Polri. Jawaban yang jujur adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan demikian. Memang dokumen-dokumen tersebut tidak menyebutkan apapun tentang kebijakan 'pembumihangusan' yang sering dikatakan telah mengarahkan tindakan TNI dan Polri setelah pemungutan suara. Bukti tentang perencanaan semacam itu mungkin ada di dalam dokumen-dokumen yang masih belum ditemukan yang menguraikan 'Operasi Cabut' Kodam IX atau mungkin dalam 'Rencana Kontinjensi 1999-2000' dari markas besar TNI. Namun tetaplah meragukan apakah dokumen-dokumen tersebut berisi pembahasan eksplisit tentang kebijakan pembumihangusan di masa setelah pemungutan suara. Sangat mungkin bahwa tidak ada rencana tertulis samasekali, dan bahwa pencarian satu bukti dokumenter yang tidak bisa dibantah pada akhirnya tidak akan mendatangkan hasil.

Walaupun demikian, kedua dokumen tersebut memberikan pemahaman yang mengungkapkan sikap resmi pemerintah terhadap Konsultasi Rakyat. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bukti yang kuat bahwa Polri dan pihak berwenang militer secara formal mengambil posisi antipati terhadap pihak prokemerdekaan, terhadap banyak pengamat dari luar negeri, UNAMET, dan juga pimpinan Gereja Katolik.

.....
* Samuel Moore, "The Indonesian Military's Last Years in East Timor: An Analysis of Its Secret Documents," *Indonesia*, No. 72 (Oktober 2001), halaman 41.

† Lihat *Sydney Morning Herald*, 24 Agustus 1999; *Jakarta Post*, 26 Agustus 1999; dan *Media Indonesia*, 27 Agustus 1999. Lihat juga Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, halaman 82.

Penilaian intelijen yang disebutkan di dalam rencana ‘Operasi Hanoir Lorosae II’ Polri dengan jelas mengungkapkannya.* Penilaian itu menyebutkan beberapa organisasi dalam negeri dan internasional telah “melakukan tindakan-tindakan ofensif baik terhadap kelompok massa prointegrasi maupun terhadap pemerintah Indonesia.”† Kelompok-kelompok yang digambarkan demikian mencakup: USAID (United States Agency for International Development – Badan Bantuan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional), AusAID (Australian Agency for International Development – Badan Bantuan Australia untuk Pembangunan Internasional), Carter Center yang berpusat di Amerika Serikat, dan sejumlah organisasi nonpemerintah Indonesia dan Timor-Leste. Penilaian itu juga mengambil posisi yang sama tidak bersahabatnya terhadap UNAMET yang dikatakan “membawa misi politis sehingga terlihat adanya sikap keberpihakan dan diskriminatif” terhadap kubu prointegrasi, dan mendukung kubu prokemerdekaan.‡ Akhirnya, dokumen tersebut mengatakan bahwa mayoritas penduduk adalah penganut Katolik yang “fanatik” dan bahwa “Hal ini dimanfaatkan oleh pimpinan agama (Uskup) untuk kepentingan politiknya dengan mempengaruhi jemaatnya untuk mendukung salah satu kelompok (antiintegrasi).”§

‘Rencana Operasi Wira Dharma-99’ TNI juga memberikan pemahaman yang sama pentingnya tentang cara berpikir para pejabat militer. Dalam satu bagian yang berjudul “Pasukan Musuh,” dokumen tersebut memasukkan CNRT, DSMPTT (Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur), dan Ojetil (Organização de Juventude de Timor Leste – Organisasi Pemuda Timor-Leste) yang semuanya adalah kelompok sipil prokemerdekaan, dan semuanya menjadi sasaran utama kekerasan yang dilakukan oleh kekuatan pro-Indonesia. Paragraf pembuka pada bagian “Pasukan Musuh” dari rencana operasi tersebut menjelaskan bahwa: “Pasukan musuh merupakan kelompok masyarakat Timor Timur yang anti-integrasi dengan Indonesia dan menolak opsi otonomi khusus yang ditawarkan Pemerintah RI.”¶

Dengan demikian, meskipun dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa kekerasan setelah pemungutan suara direncanakan pada tingkat paling tinggi, dokumen-dokumen tersebut memberikan bukti penting tentang tanggung jawab militer dan Polri atas kekerasan tersebut. Antara lain, dokumen-dokumen tersebut menegaskan bahwa pihak-pihak berwenang militer dan kepolisian Indonesia secara resmi mengambil posisi yang secara terang-terangan melanggar janji untuk tidak berpihak sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam Kesepakatan 5 Mei. Dokumen-dokumen tersebut juga membuktikan bahwa permusuhan terhadap pihak prokemerdekaan—bahkan

* Judul lengkap dari penilaian tersebut yang terkandung dalam dokumen ‘Operasi Hanoir Lorosae II’ adalah: “Perkiraan Keadaan Intelijen Kepolisian Khusus tentang Menghadapi Kontijensi Opsi I dan Opsi II di Polda Timor Timur” (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).

† Polda Timor Timur, “Perkiraan Keadaan Intelijen,” halaman 4 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).

‡ Polda Timor Timur, “Perkiraan Keadaan Intelijen,” halaman 2 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).

§ Polda Timor Timur, “Perkiraan Keadaan Intelijen,” halaman 5 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #39).

¶ Korem 164/WD, “Rencana Operasi Wira Dharma-99,” Dili, Juli 1999, halaman 2 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #34).

hingga tingkat yang menggambarkan orang sipil sebagai “pasukan musuh” —merupakan persoalan kebijakan, dan bukannya terbatas pada sikap sejumlah kecil ‘oknum’ yang didorong oleh ‘emosi’. Akhirnya, dengan memberikan perincian mengenai sikap militer dan Polri terhadap organisasi dan individu tertentu, dokumen-dokumen ini juga membantu menjelaskan pola tertentu pelanggaran hak asasi manusia pada 1999. Melihat sikap permusuhan yang terbuka seperti diungkapkan dalam dokumen-dokumen kebijakan utama tersebut, lebih mudah untuk memahami mengapa kelompok-kelompok tertentu—mencakup CNRT, DSMPTT, dan Gereja Katolik—secara khusus dijadikan sasaran.

Ringkasnya, dokumen-dokumen ini tidak memberikan bukti yang definitif tentang keterlibatan langsung jajaran tingkat tinggi pemerintah Indonesia dalam perencanaan atau pelaksanaan tindak kekerasan yang spesifik. Kenyataannya, analisis yang disampaikan di sini menunjukkan bahwa perencanaan kekerasan mungkin tidak pernah dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk tulisan. Sehingga, tuntutan atau bantahan akan pertanggungjawaban resmi pemerintah Indonesia atas kekerasan yang terjadi harus ditetapkan melalui analisis tentang peristiwa-peristiwa yang diamati di lapangan, dan penelitian yang lebih sabar terhadap ratusan dokumen yang sekarang tersedia.

Dari sudut pandang seperti itu, enam dokumen tersebut dalam hal tertentu dapat menyumbang pada pemahaman kita tentang kekerasan. Pertama, dokumen-dokumen ini membantu dalam menetapkan keberadaan dan sifat hubungan antara TNI dan milisi. Kedua, dokumen-dokumen ini menunjukkan secara pasti bahwa ada pembahasan pada jajaran tingkat tertinggi TNI mengenai rencana-rencana darurat, termasuk rencana-rencana untuk evakuasi besar-besaran, dan setidaknya kemungkinan perusakan fisik sebagai bagian dari evakuasi itu. Ketiga, dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan tanpa keraguan bahwa pihak-pihak berwenang militer dan kepolisian secara resmi mengambil posisi bermusuhan terhadap kubu prokemerdekaan (dan terhadap PBB), suatu posisi yang melanggar kewajiban mereka yang ditetapkan dalam Kesepakatan 5 Mei.

Dokumen-dokumen yang dikaji dalam bab ini juga memberikan satu petunjuk bahwa pelaku-pelaku utama yang bertanggung jawab atas kebijakan dan perencanaan militer di Timor-Leste meliputi: Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo; Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Johnny Lumintang; Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung; Panglima Komando Daerah Militer IX, Mayor Jenderal Adam Damiri; Komandan Korem 164/Wira Dharma, Kolonel Tono Suratman; dan Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Timbul Silaen. Walaupun tidak secara khusus disebut di dalam dokumen-dokumen yang tersedia, kita bisa beranggapan bahwa para perwira yang bertanggung jawab atas operasi, baik di Markas Besar TNI maupun di Kodam IX, juga terlibat.

Milisi: Sejarah, pembentukan, dan pengakuan hukum

Persoalan tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap umat manusia di Timor-Leste sangat bergantung pada sifat hubungan antara milisi dan pihak-pihak berwenang Indonesia. Apabila, seperti diklaim oleh pemerintah Indonesia, milisi bertindak tanpa dukungan atau persetujuan pemerintah, maka tanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan terletak di pundak milisi itu sendiri. Di lain pihak, jika milisi dibentuk oleh pihak-pihak berwenang Indonesia, serta menerima dukungan dan arahan dari para pejabat Indonesia, maka tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh milisi juga ada pada pihak yang berwenang tersebut.

Bab ini merupakan yang pertama dari tiga bab di dalam laporan ini yang mempelajari hubungan tersebut secara terperinci, dengan menggunakan begitu banyak bukti dokumenter dan kesaksian. Dengan memusatkan perhatian pada tiga jenis bukti—hubungan historis antara milisi dan TNI, keterlibatan para pejabat tinggi dalam membentuk milisi, dan pemberian pengakuan hukum kepada milisi—bab ini secara meyakinkan memperlihatkan bahwa kelompok-kelompok milisi itu dibentuk, didukung, dan disahkan oleh para pejabat Indonesia. Selanjutnya, temuan tersebut berarti bahwa pihak-pihak berwenang Indonesia tersebut mengemban tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, meskipun pelanggaran-pelanggaran itu secara langsung dilakukan oleh milisi.

Pola historis

Keberadaan milisi bukanlah gejala baru di Timor-Leste. Mereka telah muncul, dalam beberapa bentuk, setidaknya sejak zaman kekuasaan Portugis, dan hadir tanpa terputus selama masa pendudukan Jepang dan invasi Indonesia. Sejak 1975, sejarah milisi terkait erat dengan angkatan darat Indonesia, dan khususnya dengan pasukan kontrapemberontakan Kopassus.

Milisi sudah lama menjadi unsur pokok dalam strategi kontrapemberontakan dan kontra-intelijen Indonesia setidaknya sejak dasawarsa 1950-an. Milisi-milisi tersebut dimobilisasi dalam setiap operasi kontrapemberontakan yang pernah dilaksanakan oleh angkatan darat Indonesia. Walaupun mendapatkan pembenaran melalui doktrin militer ‘pertahanan keamanan rakyat semesta,’ alasan utama mengapa mereka digunakan adalah karena mereka murah dan efektif, membantu membangun ikatan loyalitas dengan pasukan pendudukan, dan menjadi sarana pengingkaran yang bisa meyakinkan bagi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tentara.

Sejarah tersebut memberikan bukti kuat bahwa milisi-milisi yang muncul di Timor-Leste pada 1999 merupakan bagian dari operasi intelijen militer yang terarah dan dipersiapkan dengan baik. Pandangan sekilas pada sejarah tersebut menegaskan

bahwa jelas bahwa segala sesuatu tentang organisasi, bahasa, gaya, dan repertoar dari milisi modern berasal dari doktrin militer Indonesia yang sudah mapan dan praktik kesejarahan. Ini juga membantu menjelaskan bagaimana milisi dapat tumbuh cepat, secepat yang mereka lakukan di seluruh Timor-Leste di 1998-1999.

Bahkan sebelum invasi pada Desember 1975, para perencana militer Indonesia berusaha memobilisasi penduduk lokal untuk mengumpulkan informasi intelijen dan membantu operasi-operasi militer. Pada September 1975, satu laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat dengan jelas bahwa, "Intelijen Indonesia ... telah melatih, mengorganisasikan, dan secara rahasia memasukkan 650 pasukan ireguler orang Timor ke Timor Portugis untuk membendung gerak maju pasukan Fretilin." Dalam masa setelah invasi, pasukan militer Indonesia membentuk kelompok-kelompok milisi lokal, yang dikenal sebagai kelompok Partisan, di setiap tempat setelah mereka membangun kontrol yang cukup. Sisa-sisa dari kelompok-kelompok awal 'Partisan' ini tetap terlihat di beberapa bagian Timor-Leste pada 1999, dan sebagian anggota mereka aktif dalam kelompok-kelompok milisi baru.

Dengan dimulainya operasi militer besar yang baru pada September 1977, angkatan darat Indonesia bahkan memulai dengan lebih bersemangat merekrut penduduk Timor-Leste untuk bertempur di pihaknya. Ribuan rakyat biasa Timor-Leste diwajibkan bergabung dalam operasi-operasi militer terhadap kelompok prokemerdakaan Fretilin, yang digambarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai komunis. Di awal dasawarsa 1980-an, penggunaan pasukan-pasukan sipil semacam itu telah dilembagakan. Pasukan-pasukan milisi setengah-tetap kini menyebar luas di seluruh Timor-Leste, dalam jumlah yang tertentu ada di setiap desa dan kota; dan mereka dikontrol ketat oleh perwira militer maupun pejabat pemerintah Indonesia lainnya, dengan dukungan resmi dari bupati, camat, dan kepala desa.

Beberapa dokumen rahasia angkatan darat dari 1982 memberikan perincian penting tentang asal-usul dari kesatuan-kesatuan milisi ini dan peran mereka dalam strategi kontrapemberontakan angkatan darat.[†] Dokumen-dokumen itu membuat jelas, misalnya, bahwa dasar strategi ini adalah doktrin militer 'pertahanan keamanan rakyat semesta.'^{*} Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya ini berarti bahwa rakyat Timor-Leste dapat diharapkan untuk digalang melawan "musuh" pada saat yang ditentukan. Perlu dicatat juga bahwa sebagian dari dokumen-dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Seksi Intelijen Korem Timor Timur Mayor Williem T. da Costa, yang kemudian menjabat sebagai Kepala Staf (1997-1998) dan selanjutnya Panglima (2000-2002) Komando Daerah Militer IX.

.....
^{*} U.S. Department of State, dikutip dalam James Dunn, *Timor: A People Betrayed*, Sydney, NSW: ABC Books, 2001, halaman 193.

[†] Delapan dokumen tersebut ditulis oleh Seksi Intelijen dari Komando Resor Militer (Korem) Timor Timur, dan ditandatangani oleh Komandan Korem, Kolonel Rajagukguk, atau oleh Kepala Seksi Intelijen Korem Mayor Williem T. da Costa.

[‡] Setelah menyebutkan secara tersurat doktrin ini, salah satu dokumen menyatakan secara luas: "Dengan demikian ... pada dasarnya seluruh rakyatlah yang menjadi pelawan musuh." Lihat Korem 164/Wira Dharma, Seksi Intel, "Rencana Penyusunan Kembali Rakyat Terlatih," disusun oleh Mayor Williem T. da Costa, 1982, halaman 2.

Sebagian besar orang yang diwajibkan dan ‘sukarelawan’ setempat dikelompokkan ke dalam dua badan resmi yang berbeda namun terkait—Ratih dan Hansip—dan peran dari masing-masing badan tersebut dalam menghabisi musuh dinyatakan secara terperinci dalam dokumen-dokumen resmi. Kedua badan itu adalah satuan-satuan pembantu yang bertempat di desa, yang dirancang untuk membantu angkatan bersenjata dalam mendeteksi dan memerangi musuh. Seperti milisi-milisi pada 1999, kedua badan itu diorganisasikan menurut garis militer yang dibagi ke dalam kompi, peleton, dan regu, dan ‘dibina’ oleh berbagai tokoh militer, termasuk Komandan Rayon Militer (Danramil), prajurit dari Batalion 745, dan wakil dari satuan intelijen Kopassus dengan kekuasaan besar, SGI (Satuan Tugas Intelijen).^{*} Dengan kata lain, kedua badan itu merupakan replika nyata dari milisi yang muncul pada 1999.

Kesatuan yang paling dasar adalah Ratih (Rakyat Terlatih). Orang yang direkrut ke dalam Ratih mendapatkan latihan dasar militer, dengan penekanan pada disiplin dan ideologi. Walaupun kepala desa biasanya menjadi komandan resmi mereka, dalam kenyataannya mereka dikendalikan oleh perwira militer.[†]

Setingkat di atas Ratih dalam hierarki militer adalah Hansip (Pertahanan Sipil). Mereka mendapatkan latihan militer yang lebih intensif, biasanya membawa senjataapi, dan melaksanakan berbagai fungsi tempur, termasuk pengamatan. Dalam kenyataannya Hansip dibagi dalam dua bagian, salah satunya (Kamra – Keamanan Rakyat) bertugas sebagai pembantu polisi. Bagian lainnya adalah Wanra (Perlawanan Rakyat) yang ditugaskan pada angkatan darat. Dalam praktiknya, Wanra jauh lebih penting daripada Kamra, sehingga istilah Wanra dan Hansip biasa saling dipertukarkan.

Selain pasukan-pasukan milisi dasar ini, di akhir dasawarsa 1970-an dan 1980-an angkatan darat juga membentuk sejumlah kesatuan paramiliter yang lebih terlatih, meliputi: Makikit, Halilintar, Tim Saka, Tim Sera, 59/75 Junior, Tim Alfa, dan Railakan. Kesatuan-kesatuan ini melaksanakan peran pengamatan, intelijen, dan tempur yang penting, selain juga mengambil bagian dalam operasi-operasi khusus, termasuk pembunuhan. Kesatuan-kesatuan ini secara resmi dikoordinasikan di tingkat Komando Distrik Militer (Kodim), tetapi memiliki hubungan erat dan sering melakukan operasi bersama pasukan elite kontrapemberontakan, Kopassus—dan khususnya Satuan Tugas Intelijen (SGI) dan satuan operasional yang dikenal sebagai Nanggala.[‡]

Hubungan dekat yang terus-menerus antara kelompok-kelompok paramiliter dan Kopassus/TNI ditegaskan oleh satu dokumen, bertanggal 2 Januari 1998, yang

^{*} Kehadiran SGI dan prajurit-prajurit Batalion 745 disebutkan dalam: Korem 164/ Wira Dharma, Seksi Intel, “Petunjuk Tehnis [sic] tentang Desa” (Juknis/01-A/IV/1982), halaman 6-7.

[†] Korem 164/Wira Dharma, Seksi Intel, “Rencana Penyusunan Kembali Rakyat Terlatih,” halaman 2 dan 6.

[‡] Nanggala merupakan satuan khusus Kopassus, yang dibentuk di akhir dasawarsa 1970-an. Satu satuan yang disebut Nanggala 28 dipimpin oleh Prabowo Subianto sewaktu muda, bertanggung jawab atas pembunuhan panglima Fretilin, Nicolau Lobato, pada Desember 1978.

disusun oleh ‘Pos Nanggala-13 Satuan Tugas Intelijen’. Dokumen itu memuat daftar 57 orang anggota kesatuan paramiliter Saka di Kecamatan Baguia, Kabupaten Baucau.’ Selain mengindikasikan bahwa kesatuan paramiliter Saka dalam kenyataannya dikoordinasikan oleh SGI, dokumen itu juga menunjukkan dengan jelas bahwa banyak anggota kesatuan Saka adalah anggota Nanggala-13, yang dipimpin Kopassus. Dengan kata lain, di akhir 1998, Saka dan sangat mungkin kesatuan-kesatuan paramiliter lain bukan hanya didukung oleh TNI, namun sesungguhnya mereka adalah kesatuan TNI.

Jaringan organisasi paramiliter dan milisi ini membentuk pengaman yang esensial di dalam pendudukan Indonesia dan operasi kontrapemberontakan di Timor-Leste sepanjang dua dasawarsa selanjutnya. Hansip, Ratih, beserta infrastruktur paramiliter terus berfungsi sepanjang periode ini, dan menjadi model untuk repertoar dasar latihan, berbaris, berpatroli, dan bertempur yang dikenal di seluruh Timor-Leste pada 1999. Lebih jauh lagi, banyak dari kesatuan-kesatuan milisi yang sepertinya muncul tiba-tiba pada 1999 dalam kenyataannya adalah sisa dari kesatuan-kesatuan milisi dan paramiliter lama yang telah dibentuk sejak akhir dasawarsa 1970-an dan terus berfungsi di masa antara itu.[†] Sebenarnya, seperti yang nanti dijelaskan dalam bab ini, pada 1999 pihak berwenang Indonesia sering menyebut milisi dengan menggunakan terminologi yang lama.

Walaupun demikian, mereka bukanlah satu-satunya model bagi milisi yang muncul di tahun 1999. Dalam dasawarsa 1990-an, versi baru pasukan milisi—yang lebih menyerupai regu pembunuh daripada kesatuan bantuan warga—mulai membuat kehadirannya terasa di Timor-Leste. Manifestasi yang paling dikenal dari bentuk baru ini disebut kelompok Ninja, yang pertama kali dilaporkan ke luar negeri pada 1991, tetapi sangat mungkin sudah ada setahun atau dua tahun sebelumnya.[‡] Kelompok-kelompok Ninja ini berkeliaran di jalan-jalan pada tengah malam, memakai pakaian hitam, kepala mereka terbungkus semacam topeng berwarna gelap terbuat dari rajutan benang yang menutup seluruh kepala kecuali bagian mata. Mereka mengganggu, menculik, dan kadang-kadang membunuh pendukung-pendukung kemerdekaan, kemudian meninggalkan mayat para korban di tempat-tempat umum.

.....
* Komandan Pos Nanggala-13, Satuan Tugas Intelijen (Sersan Kepala Mudji Maulani), “Daftar Nama Nama Anggota Sera (Surwan) Kec. Baguia,” 2 Januari 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #2).

† Daftar anggota kesatuan Saka, Januari 1998 yang dikutip di atas, misalnya, menunjukkan bahwa banyak dari 57 anggota yang terdaftar telah bergabung dengan kesatuan itu lebih daripada sepuluh tahun sebelumnya. Sementara banyak tahun masuk yang tercantum dalam dokumen sulit dibaca, sebagian besar berasal dari dasawarsa 1980-an dan setidaknya 11 adalah dari akhir dasawarsa 1970-an (Koleksi Yayasan HAK, Doc #2). Sama juga halnya, menurut sepucuk surat dari Eurico Guterres kepada Kepala Kepolisian Resor Dili bertanggal 22 Juni 1999, setidaknya 93 anggota milisi Aitarak pada saat itu adalah anggota kesatuan pembantu kepolisian, Kamra. Lihat: Komandan, Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Kapolres Dili, 22 Juni 1999 (Koleksi SCU, Doc #244).

‡ Bukti-bukti yang tidak langsung menunjukkan bahwa Ninja ini muncul di akhir dasawarsa 1980-an, ketika Abílio Soares, pemimpin Apodeti yang kemudian menjadi gubernur yang memiliki hubungan dekat dengan Prabowo Subianto, menjadi Walikota Dili.

Bagi orang Indonesia, dan mungkin juga bagi orang Timor-Leste, kehadiran Ninja ini membangkitkan ingatan tentang pembunuhan menakutkan yang disponsori negara terhadap sekitar 5.000 orang yang diduga penjahat kecil di pertengahan dasawarsa 1980-an di Indonesia, yang dikenal dengan singkatan Petrus (penembakan misterius).^{*} Pembunuhan tersebut dilaksanakan oleh orang-orang berpakaian sipil dan bertopeng, dan mayat korban biasanya ditinggalkan di tempat umum. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengelak bertanggung jawab. Namun pada 1989 Presiden Soeharto menyatakan dalam buku riwayat hidupnya bahwa pembunuhan tersebut memang kebijakan pemerintah—‘shock therapy’ untuk mengendalikan kriminalitas. Pengakuan itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar tangan resmi militer juga yang mengarahkan Ninja di Timor-Leste.

Militer Indonesia juga mulai mengaktifkan dan mengarahkan kembali pasukan-pasukan milisinya di wilayah perdesaan Timor-Leste pada waktu itu. Pada Oktober 1993, seorang jurubicara angkatan darat mengumumkan bahwa sekitar 3.844 orang Timor-Leste baru-baru ini telah diambil sumpah untuk menjadi anggota pasukan pendukung. Juru bicara ini tidak menyebut mereka Ratih dan Hansip atau Wanra, tetapi orang-orang yang telah disumpah itu ia sebut sebagai ‘Pasukan Adat.’ Keputusan untuk memobilisasi pasukan pendukung ini dan pilihan nama yang aneh mungkin berkaitan dengan kenyataan bahwa Indonesia pada saat itu mendapatkan tekanan internasional yang kuat untuk mengurangi kehadiran tentaranya di Timor-Leste dan menunjukkan perkembangan di bidang hak asasi manusia.

Pada 1995, sebuah kelompok baru pro-Indonesia muncul dengan banyak ciri dari kelompok Ninja yang terdahulu—yang sekarang bercampur dengan ciri-ciri gangster terkenal di Jawa yang memiliki kaitan politik (yang dikenal dengan sebutan ‘preman’). Kelompok baru ini disebut Gadapaksi (Garda Pemuda Penegak Integrasi).[†] Peran yang ditugaskan kepada Gadapaksi rupanya adalah menyusup ke perlawanan bawahan dan memancing keributan di kalangan rakyat Timor-Leste. Berpakaian hitam-hitam dan bersenjata pisau, mereka meneror Dili dan kota-kota lain, melempar batu, membakari rumah-rumah, memasang penghalang jalan, menculik, dan kadang-kadang membunuh aktivis kemerdekaan.

Seperti Ninja, para anggota dan pemimpin Gadapaksi memiliki hubungan dengan jaringan kriminal dan Kopassus.[‡] Kami mengetahui hubungan historis Gadapaksi dengan Kopassus/TNI baik melalui bukti-bukti dokumenter maupun yang lain. Di antara dokumen-dokumen itu yang paling banyak mengungkapkan adalah laporan bulanan, bertanggal 10 November 1995, tentang latihan untuk rekrutan Gadapaksi di

^{*} Tentang pembunuhan Petrus, lihat David Bourchier, “Crime, Law and Authority in Indonesia,” dalam Arief Budiman (penyunting), *State and Civil Society in Indonesia*, halaman 177-211.

[†] Gadapaksi (kadang-kadang disebut Garda Paksi atau Gada Paksi) diresmikan pada Juli 1995. *Reuters*, 19 Juli 1995.

[‡] Seorang tokoh senior pro-Indonesia yang melarikan diri dari Timor-Leste pada 1999 mengatakan kepada seorang wartawan Australia bahwa pemerintah Indonesia telah menghapuskan utang judi Eurico Guterres sebagai suap kepadanya untuk memimpin Gadapaksi. Lihat, “Timor Coup Planned,” *The Age*, 22 Juni 1999.

Surabaya, Jawa Timur. Laporan itu ditandatangani oleh perwira TNI (Kapten Handy Geniadi) dan memberikan perhatian khusus pada latihan intelijen yang diberikan kepada rekrutan. Laporan itu tidak mengatakan secara eksplisit bahwa latihan tersebut dikoordinasi oleh Kopassus, namun kesimpulan itu bisa ditarik secara logis dari fakta bahwa satu-satunya perintah yang dikutip sebagai dasar pembuatan laporan itu adalah satu surat perintah Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Komandan Kopassus.⁷ Bukti tambahan tentang hubungan antara Kopassus dan Gadapaksi terletak dalam fakta bahwa komandan SGI di Dili periode 1996-1999 sebelumnya bertugas melatih Gadapaksi di Jawa Tengah dan kemudian di Surabaya.

Gadapaksi masih tetap aktif pada 1998, dan terus mendapatkan dukungan kuat dari pihak berwenang Indonesia. Satu pertemuan Gadapaksi pada 22 Juni 1998 dihadiri antara lain oleh Gubernur Timor Timur, Ketua DPRD Timor Timur, dan Bupati Lautém. Satu laporan rahasia intelijen militer tentang pertemuan tersebut, yang disampaikan kepada Komandan Resor Militer Timor Timur, Kolonel Suratman, pada 23 Juni 1998 mengutip pernyataan sang gubernur: “Saya secara resmi menyatakan masuk sebagai anggota Garda Paksi [sic].”⁸

Gadapaksi bertahan sampai awal 1999 ketika, nyaris tiba-tiba, kelompok itu menghilang dan kelompok milisi Aitarak muncul sebagai penggantinya. Hubungan antara dua kelompok tersebut dipersonifikasi oleh jalur karier dari salah seorang pemimpin milisi Timor-Leste yang paling terkenal: Eurico Guterres. Di antara 1995 sampai Januari 1999, ia adalah pemimpin Gadapaksi.⁹ Ketika milisi dimobilisasi di awal 1999, ia mendapatkan imbalan untuk kesetiiaannya dengan diangkat menjadi komandan Aitarak, dan komandan Sektor B seluruh milisi (PPI). Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa hubungan dengan Kopassus/SGI berubah dengan terjadinya perubahan Gadapaksi menjadi Aitarak.

Pendeknya, milisi yang tampak hadir secara tiba-tiba pada 1999 samasekali tidak baru. Banyak kelompok milisi yang sudah berkeliaran selama beberapa tahun, walaupun sering dengan nama yang berbeda. Fakta itu membantu menjelaskan

.....
* Surat perintah tersebut adalah ‘Sprin/489/VII/1995’. Lihat: Komandan Kelompok BLK Surabaya (Kapten Handy Geniadi), “Laporan Bulanan Kegiatan Pelatihan Gada Paksi di BLK Surabaya,” 10 November 1995 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #1).

† Lihat: Dandim 1627 (Letnan Kolonel Endar Priyanto) kepada Danrem 164/WD dan lain-lain, “Laporan hasil pertemuan di Gada Paksi,” 23 Juni 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #3).

‡ Guterres tampaknya tetap menjadi pemimpin Gadapaksi sampai beberapa saat pada Januari 1999, ketika ia menulis surat kepada Pemerintah Daerah Timor Timur meminta uang Rp7,5 juta untuk mendukung kegiatan Gadapaksi. Lihat: Ketua DPP Gada Paksi (Eurico Guterres) kepada Asisten III Kessos Sekwilda Tingkat I Timor Timur, Januari 1999 (Koleksi SCU, Doc #205). Setelah tanggal tersebut, Gadapaksi menghilang dari peredaran. Untuk suatu waktu, kelompok itu digantikan oleh FPTT (Forum Persatuan Timor Timur) satu organisasi pro-integrasi yang didirikan pada 7 Desember 1998, dan dipimpin oleh Guterres. Dalam kedudukan itu pada Januari 1999 Guterres menulis kepada Kepala Biro Keuangan Pemerintah Daerah Timor Timur, untuk meminta agar seorang staf biro tersebut ditugaskan membantu FPTT. Staf itu adalah Inácio de Jesus Soares, yang kemudian muncul sebagai Wakil Komandan Aitarak. Lihat: Ketua Umum Forum Persatuan Timor Timur (Eurico Guterres) kepada Kepala Biro Keuangan Pemda Tk-1 Timor Timur, 5 Januari 1999 (Koleksi SCU, Doc #159); dan Forum Persatuan Timor Timur (FPTT) kepada Danrem 164/WD, [Desember] 1998 (Koleksi SCU, Doc# 233). FPTT tampaknya dibubarkan pada satu hari di bulan Januari 1999 dan digantikan dengan Aitarak dan FPDK.

bagaimana milisi bisa diorganisasikan dan dimobilisasi dengan begitu cepat pada 1999. Ini juga membantu menjelaskan gaya khas dan repertoire kekerasan mereka. Diciptakan oleh kekuasaan Indonesia selama 24 tahun, dan dibentuk oleh doktrin dan praktik militer Indonesia, milisi melakukan brutalitas terencana yang menjadi sentral dari budaya kelembagaan TNI itu sendiri. Yang terpenting, pola historis mobilisasi milisi oleh TNI mengajukan bukti yang meyakinkan bahwa milisi yang menjadi menonjol pada 1999 merupakan produk dari strategi standar TNI, yang darinya tindakan kekerasan yang mereka lancarkan merupakan satu bagian penting.

Pembentukan milisi

Terdapat bukti yang meyakinkan bahwa hubungan erat antara pihak berwenang Indonesia dan milisi berlanjut sepanjang 1999, dan bahwa para perwira tinggi militer dalam kenyataannya secara langsung terlibat dalam pembentukan dan koordinasi milisi pada periode tersebut. Bukti-bukti itu datang baik dari pernyataan-pernyataan mantan tokoh prointegrasi, dan dari komunikasi rahasia antara para perwira tinggi TNI dan pejabat pemerintah sipil. Karena sifat dan tindakan kelompok-kelompok tersebut, keterlibatan pihak berwenang dalam pembentukan milisi mungkin menjadi perangsang untuk melakukan, dan dengan demikian memiliki keterlibatan dalam, pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kejahatan terhadap umat manusia.

Beberapa informasi tentang peran para perwira tinggi TNI di dalam membentuk milisi di akhir 1998 dan awal 1999—dan tentang perintah TNI untuk melakukan tindak kekerasan—datang dari para mantan pejabat pemerintah Indonesia dan tokoh Timor-Leste pro-Indonesia. Di awal 1999, tokoh lama prointegrasi Tomás Gonçalves mengatakan kepada televisi Australia bagaimana pembentukan milisi dimulai pada 1998:

“Perintah datang dari panglima daerah [Mayor Jenderal] Adam Damiri kepada komandan Timor Timur [Kolonel Tono Suratman] dan komandan Pasukan Khusus [Letnan Kolonel] Yayat Sudrajat—habisi semua CNRT, semua orang prokemerdekaan, termasuk orang tua, anak laki-laki dan perempuan, dan cucu-cucunya. Komandan Sudrajat menjanjikan pembayaran Rp200.000 [US\$ 26,6] per orang kepada siapa saja yang mau masuk milisi.”

Sumber-sumber yang lain menegaskan peran sentral Adam Damiri, Tono Suratman, dan Yayat Sudrajat dalam membentuk milisi, tetapi menunjukkan juga bahwa perwira yang lebih tinggi—khususnya Mayor Jenderal Kiki Syahnakri dan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim—juga terlibat langsung. Sumber-sumber tersebut telah menggambarkan serangkaian pertemuan yang terjadi dari pertengahan 1998

* ABC, *Four Corners*, “The Ties That Bind,” 14 Februari 1999.

hingga awal 1999, di Dili, Denpasar, dan Jakarta, di mana para perwira tinggi TNI merumuskan rencana untuk mobilisasi pasukan milisi.

Banyak bukti tentang pertemuan tersebut diringkaskan di dalam satu surat dakwaan terhadap delapan pejabat senior Indonesia, yang diajukan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat Timor-Leste pada Februari 2003.^{*} Halaman-halaman yang relevan dengan persoalan pembentukan milisi terbaca sebagai berikut:

“11. Pada atau sekitar bulan Agustus 1998, Adam Rachmat DAMIRI mengatur agar seorang Timor-Leste pemimpin pro Indonesia dapat terbang dari Timor-Leste ke Denpasar, Bali untuk sebuah pertemuan. Pada pertemuan ini, DAMIRI memberitahukan pemimpin orang Timor-Leste tersebut untuk mendirikan sebuah kelompok untuk mempromosikan integrasi.

12. Pada atau sekitar Agustus 1998, DAMIRI mengadakan perjalanan ke Dili dan bertemu dengan para komandan TNI dan pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste. Suhartono SURATMAN hadir pada pertemuan ini. DAMIRI memberitahu kelompok itu bahwa terdapat banyak perhatian internasional yang difokuskan terhadap Timor-Leste dan ini merupakan masalah untuk Indonesia. Dia menyampaikan kepada mereka bahwa mereka harus merancang rencana untuk membentuk organisasi-organisasi yang akan menyebarkan perasaan pro-Indonesia di seluruh Timor-Leste. Dia memberitahukan mereka bahwa mereka harus menciptakan sebuah pasukan pertahanan sipil yang tegas sesuai dengan model yang sebelumnya telah didukung oleh TNI dan bahwa pasukan ini seharusnya diperbesar dan dikembangkan untuk menjaga integrasi.

13. Pada atau sekitar November 1998, Adam DAMIRI sekali lagi mengadakan perjalanan ke Timor-Leste. Selama kunjungan ini dia bertemu dengan para pemimpin pro-Indonesia di Dili, termasuk orang-orang yang kemudian menjadi pemimpin kelompok-kelompok milisi. DAMIRI minta para laki-laki ini untuk gabung bersama dan membantu TNI untuk melawan kelompok pro kemerdekaan ... Selama kunjungan ini dengan para pemimpin pro Indonesia, DAMIRI memuji Eurico Guterres yang akan menjadi pemimpin milisi di masa depan sebagai pemuda yang bersedia berjuang untuk integrasi dan mengatakan bahwa dia bersedia memberikan lima puluh juta rupiah kepada Guterres untuk mulai pekerjaannya.

14. Pada atau sekitar November 1998, SURATMAN bertemu dengan para pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di markasnya di Dili. Yayat SUDRAJAT hadir pada pertemuan ini. SURATMAN memberitahu kepada kelompok tersebut bahwa dia ingin Eurico Guterres, yang

* Timor Leste, Wakil Jaksa Penuntut untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003.

akan menjadi pemimpin milisi di masa depan, untuk membentuk sebuah organisasi baru untuk membela integrasi yang mirip kelompok pemuda pro-Indonesia Gada Paksi.

15. Pada awal 1999 Zacky Anwar MAKARIM menerima para anggota pendiri kelompok pro-Indonesia Barisan Rakyat Timor Timur [BRTT] di kantornya di Jakarta. Selama pertemuan ini dia mengatakan bahwa perang gerilya akan dibutuhkan untuk mengatasi para pendukung kemerdekaan kalau opsi otonomi kalah dalam jajak pendapat.

16. Pada atau sekitar Februari 1999, DAMIRI bertemu dengan para pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di Markas Besar Komando Daerah Militer IX di Denpasar, Bali. DAMIRI memberitahukan para laki-laki tersebut bahwa TNI siap memberikan dukungan rahasia kepada pasukan pro-Indonesia. Dia menjelaskan bahwa hal ini harus rahasia untuk menghindari perhatian dan kritik internasional. DAMIRI minta para laki-laki tersebut mengumpulkan orang Timor-Leste yang telah bertugas di TNI. Dia memberitahukan mereka bahwa mereka harus bertemu dengan SURATMAN untuk menerima pengarahan selanjutnya.

17. Pada atau sekitar Februari 1999, SURATMAN bertemu dengan seorang pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di Dili. Dia memberitahukannya bahwa karena TNI berada di bawah sebuah rezim reformasi, TNI tidak dapat ikut serta dalam operasi terbuka untuk melawan gerakan kemerdekaan. SURATMAN minta pemimpin pro-Indonesia untuk membentuk sebuah kelompok milisi. SURATMAN mengatakan bahwa TNI bersedia memberikan bantuan macam apapun yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok milisi.

18. Pada atau sekitar Februari 1999, SUDRAJAT bertemu dengan personel TNI dan para pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di markas Satuan Tugas Intelijen di Dili. SUDRAJAT memberitahukan kelompok tersebut bahwa Satuan Tugas Intelijen mempunyai sebuah daftar pendukung kemerdekaan yang akan dibunuh. Dia mengatakan bahwa Satuan Tugas Intelijen dan kelompok-kelompok pro-Indonesia akan bekerjasama untuk melaksanakan pembunuhan ini. Dia mengatakan bahwa pasukan KOPASSUS berpakaian sebagai penjahat akan mulai melaksanakan pembunuhan pendukung prokemerdekaan.

19. Pada atau sekitar Maret 1999, Kiki SYAHNAKRI bertemu dengan para pemimpin pro-Indonesia Timor-Leste di Markas Besar TNI di Jakarta. SYAHNAKRI memberitahukan kelompok tersebut bahwa TNI akan mendukung usaha pro-Indonesia dan bahwa MAKARIM bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan menjelang jajak pendapat. SYAHNAKRI memberitahukan mereka bahwa senjataapi telah dikirim ke Timor Leste dan ketika mereka kembali ke Dili, mereka harus menghubungi SURATMAN untuk mengatur pembagian senjata.”

Bukti tambahan tentang dukungan tingkat tinggi kepada milisi datang dari sejumlah dokumen rahasia dan komunikasi radio yang muncul sejak 1999. Dalam laporan rahasia Garnadi bertanggal 3 Juli 1999, yang dibahas dalam Bab 5, seorang pejabat tinggi dari kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyebut milisi Timor-Leste sebagai “pahlawan integrasi” yang pendapatnya harus diperhatikan dalam setiap perencanaan kontinjensi setelah pemungutan suara.^{*} Serupa dengan itu, dalam sepucuk surat rahasia kepada Presiden Habibie, bertanggal 6 September 1999, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Wiranto, menjelaskan bahwa pasukan-pasukan TNI telah kesulitan mengendalikan kekerasan dalam periode setelah pemungutan suara karena “Adanya hubungan kedekatan emosional antara aparat keamanan dengan masyarakat prointegrasi.”[†]

Pernyataan-pernyataan oleh pejabat-pejabat tinggi tersebut mencerminkan satu simpati yang luas kepada milisi di dalam lingkaran pejabat tertinggi, walaupun tidak sampai mengonfirmasikan peran langsung TNI dalam memobilisasikan dan mengoordinasikan kegiatan milisi. Namun bukti ke arah itu dilaporkan telah terungkap dalam serangkaian komunikasi rahasia melalui radio dan telepon yang disadap oleh Defence Signals Directorate (DSD – Direktorat Sinyal Pertahanan) Australia pada 1999. Transkripsi lengkap dari sadapan tersebut belum dibuka kepada masyarakat umum, tetapi cuplikan-cuplikannya yang dilaporkan media tampak menegaskan tuduhan-tuduhan yang dibuat dalam surat dakwaan Februari 2003. Cuplikan-cuplikan itu juga menambahkan kekhususan dan perincian mengenai asal-usul dukungan pihak berwenang kepada milisi, dan identitas dari orang-orang yang terlibat.

Misalnya, satu pembicaraan telepon antara Danrem Kolonel Tono Suratman dan Eurico Guterres, yang dilaporkan disadap pada 5 Mei 1999, tampak menegaskan keterlibatan langsung Suratman di dalam operasi-operasi milisi. Dalam pembicaraan melalui telepon itu, Suratman menanyakan kepada Guterres di mana ia mengumpulkan pasukan milisinya untuk unjuk kekuatan di Dili. Guterres disebutkan menjawab bahwa ia telah mengumpulkan sekitar 400 orang milisi di luar sebuah hotel di Dili (Hotel Tropical) yang dijadikan markas besar Aitarak.

Sekitar satu bulan kemudian, pada 1 Juni 1999, DSD Australia dilaporkan menyadap pembicaraan telepon yang lain antara kedua laki-laki itu. Jelas untuk menyembunyikan keterlibatan langsungnya dengan milisi, Kolonel Suratman dikatakan memberitahu

.....
^{*} Penulis laporan, H.R. Garnadi, seorang pensiunan mayor jenderal, menulis dalam kedudukan resminya sebagai asisten untuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, dengan tanggung jawab mengenai politik dalam negeri (Pol/Dagri) dan sebagai anggota badan gabungan tingkat menteri untuk Timor Timur (P4-OKTT) yang dipimpin oleh Feisal Tanjung. Lihat Garnadi, “Gambaran umum apabila Opsi I gagal,” 3 Juli 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #35)

[†] Surat dari Jenderal Wiranto kepada Presiden Habibie (No. R/511/P-01/03/14/Set) tentang “Perkembangan lanjut situasi Timtim dan saran kebijaksanaan penanganannya,” 6 September 1999 (Koleksi HRU, Doc. TNI #7). Mengungkapkan pandangan yang sama pada Oktober 2000, Mayor Jenderal Endriartono Sutarto (Asisten Operasi Kepala Staf Umum TNI pada tahun 1999) mengatakan: “Ini adalah psikologi prajurit kami, karena telah begitu lama memiliki hubungan kerja sama (dengan milisi) untuk mengamankan Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia.” *Channel News Asia* (Singapore), 12 Oktober 2000.

Guterres, “Jangan berhubungan langsung dengan saya. Hubungi saya melalui Bambang.” Bambang yang disebut oleh Suratman adalah juga seorang perwira senior TNI di Timor-Leste, kepala seksi intelijen Korem, Mayor R.M. Bambang Wisnumurty. Bersama dengan perwira intelijen yang lain, Letnan Masbuku, Mayor Bambang menjadi satu titik penghubung penting antara TNI dan milisi.

Perwira TNI lain, dengan kedudukan lebih tinggi, yang tampaknya memelihara hubungan dekat dengan milisi adalah Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon, yang pada 1999 menjabat sebagai Kepala Staf Kodam IX. Sebagai mantan komandan militer di Timor-Leste (1995-1997), ia telah cukup lama dicurigai terlibat dalam membentuk dan menggerakkan kelompok-kelompok milisi di Timor-Leste. Hubungannya dengan milisi agaknya ditegaskan oleh satu percakapan melalui telepon pada 14 Februari 1999, yang disadap oleh DSD. Percakapan itu antara pemimpin milisi Eurico Guterres dan seorang perwira dari unit Kopassus, Satgas Tribuana VIII. Berbicara tentang anggota milisi Mahidi yang terluka, seorang perwira Kopassus dilaporkan berkata: “Kami tahu bahwa Brigadir Jenderal Simbolon mengkhawatirkan seorang anakbuahnya yang terluka.”[†]

Simbolon dikenal memiliki hubungan dekat yang khusus dengan Cancio Lopes de Carvalho, komandan milisi Mahidi yang bermarkas di Ainaro, dan komandan umum PPI Sektor C. Sebenarnya, dalam pengertian tertentu nama dari kelompok milisinya, Mahidi, merupakan penghormatan kepada sang jenderal, Mahidin Simbolon. Hubungan khusus itu bisa membantu menjelaskan kemunculan Cancio Carvalho sebagai salah satu dari pemimpin milisi yang paling kuat di Timor-Leste, dan ciri agresif yang khusus dari kelompok milisinya.[‡]

Perwira yang paling banyak dicurigai sebagai koordinator utama milisi di Timor-Leste—dan disebut namanya dalam surat dakwaan Februari 2003 terhadap Jenderal Wiranto dan lain-lain—adalah Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim. Sejarah karier Makarim membuatnya menjadi kandidat ideal untuk posisi itu, dan penunjukannya sebagai anggota militer senior untuk Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur yang dibentuk pemerintah Indonesia segera mengejutkan para pengamat lokal maupun internasional. Sampai dengan Januari 1999, ia menjabat sebagai kepala badan intelijen militer Indonesia, BIA, sebuah lembaga dengan pengalaman bertahun-tahun menjalankan operasi-operasi kontra-intelijen dalam situasi seperti yang terjadi di Timor-Leste.

Penting diperhatikan bahwa di awal dasawarsa 1990-an Makarim ditugaskan sebagai seorang perwira intelijen di Aceh, dalam konteks operasi besar-besaran kontrapemberontakan dalam mana ribuan penduduk Aceh terbunuh. Salah satu ciri penting dari operasi tersebut, walaupun tidak banyak diketahui pada saat itu, adalah

.....
* *Sydney Morning Herald*, “Silence over crime against humanity,” 14 Maret 2002.

† *Sydney Morning Herald*, “Silence over crime against humanity,” 14 Maret 2002.

‡ Juga patut dicatat bahwa kelompok-kelompok milisi yang melakukan kekerasan di Papua Barat muncul ketika Mahidin Simbolon, yang waktu itu berpangkat mayor jenderal, menjadi Panglima Daerah Militer di sana.

mobilisasi kelompok-kelompok milisi lokal, dan penggelaran mereka di dalam menghancurkan gerakan oposisi bersenjata, Aceh Merdeka, yang sekarang lebih dikenal sebagai GAM (Gerakan Aceh Merdeka).^{*} Mayor Jenderal Makarim banyak diyakini sebagai orang yang bertanggung jawab atas operasi tersebut, sehingga kedatangannya di Timor-Leste menumbuhkan kekhawatiran bahwa strategi di Aceh akan dilaksanakan di Timor-Leste.

Peran Makarim sebagai bos milisi belum, dan mungkin bahkan tidak pernah bisa, dikonfirmasi. Namun sadapan DSD dari awal September 1999 tampak membenarkan dugaan bahwa ia bertugas sebagai seorang koordinator operasi pro-otonomi, yang kelompok-kelompok milisi hanyalah salah satu bagian darinya. Sadapan-sadapan itu, seperti yang dilaporkan, mengungkapkan bahwa Makarim menghubungi beberapa tokoh kunci militer dan para pemain politik baik di Dili maupun di Jakarta, dan membahas dengan mereka hasil pemungutan suara serta rencana setelah pemungutan suara. Salah seorang yang sering berbicara dengan Makarim di hari-hari segera setelah pemungutan suara adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, dan dua pensiunan jenderal lain yang menjabat menteri kabinet pada saat itu, yaitu Letnan Jenderal Hendropriyono dan Mayor Jenderal Yunus Yosfiah. Ketiga orang ini pernah bertugas militer di Timor-Leste, dengan latar belakang intelijen militer atau Kopassus, atau keduanya.

Di Dili, Makarim disebutkan berbicara dengan Brigadir Jenderal Glenni Kairupan, salah seorang perwira angkatan darat lain yang berpengalaman di Timor-Leste, dan para pemimpin kelompok pro-otonomi, antara lain Basilio Araújo. Pembicaraan-pembicaraan tersebut, demikian dilaporkan, mengungkap suatu kekhawatiran tentang hasil pemungutan suara dan potensi pembelotan para pemimpin kunci milisi. Dalam suatu pembicaraan dengan Basilio Araújo, pada 4 September 1999, Makarim tampak mengancam akan menyuruh membunuh Eurico Guterres kalau ia membelot pada saat terakhir. Setelah meminta Araújo untuk mengawasi Guterres, Makarim dilaporkan mengatakan: "Saya akan mengurusnya kalau dia menyeberang."[†]

Ringkasnya, bukti yang tersedia memberikan dukungan kuat untuk tuduhan umum yang dibuat dalam surat dakwaan untuk Wiranto dan lain-lain pada Februari 2003, bahwa:

"Selama periode menjelang jajak pendapat, pejabat Indonesia mendirikan dan menguatkan kelompok-kelompok sipil untuk berkampanye untuk opsi otonomi. ... [dan bahwa] kelompok-kelompok didirikan dan dipertahankan dengan tindakan aktif para pejabat Indonesia di dalam Angkatan Bersenjata Indonesia ... dan pemerintah sipil."[‡]

^{*} Lihat Geoffrey Robinson, "Rawan is as Rawan Does: Restoring Order in New Aceh," *Indonesia*, No. 66 (Oktober 1998).

[†] *Sydney Morning Herald*, "Silence over crime against humanity," 14 Maret 2002.

[‡] Timor-Leste, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003, paragraf 10.

Pengakuan politik dan hukum

Milisi secara efektif diberi status hukum dan politik oleh para pejabat Indonesia. Pengakuan semacam itu membawa sejumlah keuntungan praktis tertentu bagi milisi, dan memberikan mereka akses ke lingkaran inti kekuasaan. Lebih penting lagi, ini berarti bahwa pihak berwenang Indonesia mengemban tanggung jawab hukum dan politik untuk tindakan-tindakan mereka, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap umat manusia.

Pejabat-pejabat militer, kepolisian, dan sipil pada awalnya tidak menutup-nutupi dukungan mereka kepada kelompok pro-otonomi dan milisi. Mulai akhir 1998, dan dengan frekuensi yang meningkat pada awal 1999, para pejabat TNI, Polri, dan pemerintah sipil mengambil bagian dalam berbagai upacara yang menandai pembentukan kelompok-kelompok milisi, atau memberikan semangat kepada kelompok-kelompok yang telah terbentuk untuk bertindak melawan kekuatan prokemerdekaan.⁶ Kegiatan yang terdokumentasi mencakup upacara peresmian di Cassa (12 Desember 1998), Same (11 Maret 1999), Viqueque (11 Maret 1999), Dili (17 April 1999), Maliana (April 1999), Suai (pertengahan April 1999), Oecussi (1 Mei 1999), Manatuto (8 Mei 1999), Lolotoe (10 Mei 1999), Laclubar (18 Mei 1999), dan Gleno (April atau Mei 1999). Tanpa kecuali, Dandim, Kapolres, dan bupati masing-masing wilayah hadir di semua upacara ini. Dalam beberapa kasus, upacara dihadiri oleh pejabat dari jajaran yang lebih tinggi, termasuk komandan militer di Timor-Leste, Kolonel Tono Suratman.⁷

Salah satu contoh yang paling jelas mengenai dukungan publik semacam itu terjadi pada 17 April 1999 ketika para pejabat penting—termasuk Gubernur Timor Timur, Bupati Dili, Kolonel Tono Suratman, dan Mayor Jenderal Kiki Syahnakri⁸—berkumpul di depan kantor gubernur untuk menyaksikan rapat umum pro-otonomi, yang dihadiri oleh ratusan anggota milisi dari seluruh Timor-Leste.⁹ Menurut berbagai kesaksian tentang pawai tersebut, pemimpin milisi Eurico Guterres menyerukan kepada semua yang hadir untuk “melaksanakan pembersihan terhadap semua orang yang telah mengkhianati integrasi. Tangkap dan bunuh mereka kalau perlu.”¹⁰

* Sebagaimana yang ditulis oleh kepala misi UNAMET, Ian Martin: “... tidak ada penyembunyian tentang tingkat persetujuan resmi pada keberadaan milisi: para pejabat militer, kepolisian, dan pemerintah sipil menghadiri upacara peresmian dan acara-acara lain dengan milisi di seluruh Timor-Leste.” Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, hal. 25.

† Upacara di Manatuto—yang dipimpin oleh bupati dan dihadiri oleh sekitar 5.000 orang—dihadiri oleh Danrem Kolonel Tono Suratman. Lihat Kodim 1631/Manatuto, Laporan Harian Intelijen Rahasia, 12 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #23).

‡ Menurut keterangan yang belum dikukuhkan, Mayor Jenderal Adam Damiri dan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim juga hadir.

§ Satu laporan intelijen TNI tentang upacara tanggal 17 April memperkirakan bahwa yang hadir 1.645 anggota milisi. Menurut laporan itu, kelompok-kelompok yang hadir meliputi: Aitarak (760), BMP (400), Laksaur (75), Mahidi (75), AHI (80), Naga Merah (75), Morok (80), Alfa (50), dan Saka (50). Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/200/1999, 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

¶ Dikutip dalam Amnesty International, *Seize the Moment* (AI Index ASA 21/49/99), 21 Juni 1999, halaman 20.

Kemudian pada siang itu, diperkirakan 1.645 anggota milisi bergerak mengamuk di seluruh Dili, menembak-nembakkan senjata mereka, dan menyerang rumah tokoh prokemerdekaan yang terkenal, Manuel Carrascalão, serta membunuh setidaknya 12 orang. (Lihat studi kasus: Pembantaian di rumah Carrascalão.)

Tidak ada satupun suara pemerintah Indonesia yang disampaikan untuk memprotes pernyataan Guterres yang membakar itu, dan tidak ada usaha serius yang dibuat untuk mencegah kekerasan milisi. Sebaliknya, para pejabat yang berkuasa sungguh-sungguh berusaha menolak bertindak, dan dengan berbuat demikian secara efektif memfasilitasi dan mendukung kekerasan. Dari antara mereka yang gagal bertindak adalah komandan militer Timor-Leste, Kolonel Tono Suratman. Ketika amukan milisi dimulai, Manuel Carrascalão datang ke kantor Tono Suratman dan meminta Danrem itu untuk bertindak. Menurut Menteri Luar Negeri Irlandia, David Andrews, yang berada di sana, Kolonel Suratman tidak peduli dan tidak melakukan apa-apa.^{*}

Selain pengakuan politik *de facto* semacam itu, pemerintah Indonesia juga memberikan status legal resmi kepada kelompok-kelompok milisi. Dalam beberapa bulan pertama 1999, pihak berwenang Indonesia menggolongkan milisi sebagai Wanra, Hansip, dan Ratih dan kadang-kadang Surwan (singkatan dari Sukarelawan) —yaitu sebagai kesatuan-kesatuan pertahanan warga yang resmi yang telah ada selama bertahun-tahun. Ini bukanlah sekadar tindakan hubungan masyarakat; terminologi yang sama digunakan dalam laporan-laporan dan memo-memo rahasia TNI. Misalnya, dalam sepucuk surat pada Maret 1999, seorang personel Kopassus di Baucau menyebut kelompok milisi Saka, Sera, dan Alfa sebagai ‘Ratih.’[†] Makna dari penggolongan ini adalah bahwa hal ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok milisi telah diberi kedudukan hukum oleh pemerintah Indonesia.

Kedudukan hukum semacam itu bermakna hubungan istimewa dengan badan-badan pemerintah, terutama TNI dan kesatuan-kesatuan Kopassus. Sifat dari hubungan khusus itu ditunjukkan melalui berbagai dokumen pada 1999. Misalnya, dalam sepucuk surat pada Maret 1999, seorang perwira Kopassus meminta kepada kantor dinas kesehatan Baucau untuk menyediakan obat-obatan kepada sekitar 600 anggota Ratih dan keluarga mereka. Tidak ada alasan medis yang mendesak untuk permintaan tersebut. Sebaliknya, tujuan eksplisitnya adalah untuk memberikan penghargaan kepada para anggota Ratih atas bantuan mereka dalam mendukung operasi TNI dan untuk meningkatkan semangat mereka.[‡]

Bahkan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Wiranto, jelas menganggap kelompok-kelompok milisi sebagai satu unsur yang dapat diterima dan sah dalam strategi militer. Dalam satu rencana darurat yang dikutip oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (KPP-HAM), Wiranto menggambarkan milisi sebagai berikut:

^{*} Ian Martin, *Self-Determination in East Timor*, halaman 27.

[†] Lihat: Komandan Satuan Lapangan-A, Satuan Tugas Tribuana-VIII, kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II Kab. Baucau, “Permohonan Dukungan Obat Bulanan Pos dan Kes Satlap-A,” Maret 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #14).

[‡] Ibid.

“Kekuatan bersenjata berjumlah kurang-lebih 1.100 orang dengan 546 pucuk senjata berbagai jenis termasuk rakitan, mereka tergabung dalam organisasi-organisasi prointegrasi. Massa pendukung militan 11.950 orang tergabung dalam organisasi-organisasi perlawanan seperti Besi Merah Putih, Aitarak, Mahidi, Laksaur Merah Putih, Sakunar, Ahi, Jati Merah Putih, Darah Integrasi, Dadurus Merah Putih, Guntur Kailak, Halilintar Junior, Tim Pancasila, Mahadomi, Ablai, dan Naga Merah.”

Walaupun menurut pandangan mereka kelompok-kelompok milisi itu sah, dengan meningkatnya kemungkinan pengamatan internasional, pihak berwenang Indonesia membuat usaha untuk memberikan legalitas sipil baru kepada kelompok-kelompok milisi. Mulai April 1999, kelompok-kelompok milisi penting secara resmi digolongkan sebagai organisasi keamanan sukarela warga, atau Pam Swakarsa. Istilah tersebut telah digunakan untuk mengabsahkan kelompok-kelompok pemuda yang dimobilisasi untuk memberikan “keamanan” di wilayah-wilayah lain Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam pembicaraan dengan UNAMET dan dalam pernyataan-pernyataan publik, para pejabat pemerintah bersikeras bahwa kelompok-kelompok di Timor-Leste bukanlah milisi tetapi Pam Swakarsa, dan bahwa aktivitas mereka sepenuhnya sesuai dengan hukum.

Status resmi kelompok-kelompok milisi sebagai Pam Swakarsa dikonfirmasi oleh dua dokumen. Dokumen pertama adalah satu perintah dari Gubernur Timor Timur, Abílio Osório Soares, dan Komandan Korem Timor Timur, Kolonel Tono Suratman, bertanggal 23 April 1999 yang memerintahkan pembentukan Pam Swakarsa di seluruh wilayah Timor-Leste.[†] Sedang yang kedua adalah satu instruksi yang datang dari pemerintah Kabupaten Dili, juga dari April 1999, yang secara resmi memasukkan milisi Aitarak sebagai unsur integral dari Pam Swakarsa, dan memberikan daftar sejumlah pejabat sipil dan militer sebagai pemimpin mereka.[‡]

Bahkan setelah seruan untuk membentuk Pam Swakarsa menyebar di seluruh Timor-Leste, pejabat-pejabat TNI dan yang lain terus menggambarkan milisi sebagai bagian dari aparat pertahanan sipil yang telah lama berdiri; yaitu sebagai Wanra, Hansip, dan Ratih. Dalam satu laporan Perwira Penghubung Militer UNAMET di Kabupaten Viqueque bertanggal 5 Agustus 1999 dicatat bahwa latihan TNI dengan milisi “dijelaskan sepintas sebagai kegiatan Wanra yang sah atau sebagai kegiatan kemasyarakatan dari TNI ... Sama halnya dengan PAM-Swakarsa-isasi milisi di Dili, kami melihat milisi yang punya hubungan dengan TNI tampil sebagai Wanra dan Hansip.”[§]

* Wiranto, dikutip dalam Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (Internal), Jakarta, Januari 2000, paragraf 40.

† Surat itu sendiri belum pernah ditemukan hingga kini, namun dokumen-dokumen resmi lain menyebutkan dengan eksplisit dokumen itu.

‡ Lihat: Bupati Dili, “Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. I Dili, No. 33 Tahun 1999, Tentang Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) dan Ketertiban Kota Dili,” 14 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #304).

§ UNAMET Viqueque, “Outline of Pro-Integration Militia in Viqueque Area,” 6 Agustus 1999. Dimuat

Karena adanya kaitan historis di antara kesatuan-kesatuan bantuan sipil dan milisi baru, klaim ini mungkin agak mendekati kebenaran. Klaim itu sekaligus menyembunyikan fakta bahwa pada Juni 1999, kelompok-kelompok milisi secara resmi telah diorganisasikan ke dalam satu struktur tunggal gaya militer, dengan nama yang eksplisit militer ‘Pasukan Pejuang Integrasi’ (PPI), dan mendapatkan komando dan instruksi dari para pemimpin organisasi tersebut. Struktur tersebut, yang secara resmi diakui oleh pihak berwenang Indonesia, menambah bobot pada klaim bahwa kelompok-kelompok milisi diorganisasikan secara resmi, bukan spontan, dan bahwa aksi-aksi mereka—termasuk tindak kekerasan—dikoordinasikan.

Status resmi dari kelompok milisi, dan hubungan dekat mereka dengan TNI, lebih jauh dikonfirmasi oleh satu laporan rahasia tertanggal 21 Juni 1999, dari Kodim Dili kepada Korem. Laporan itu merupakan jawaban atas permintaan dari kepala seksi intelijen militer Timor-Leste untuk klarifikasi tentang sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan oleh organisasi nonpemerintah setempat, Yayasan HAK. Dalam rangka memeriksa laporan ini, Kodim Dili memberikan daftar pelanggaran hak asasi manusia itu kepada Aitarak, yang anggota-anggotanya merupakan pelaku utama pelanggaran yang disebutkan dalam laporan. Tidak mengejutkan, pemimpin Aitarak menyatakan bahwa semua tuduhan tersebut tidak benar. Penting dicatat bahwa pernyataan pemimpin Aitarak diterima tanpa diperiksa lebih lanjut dan disampaikan kepada Korem sebagai temuan Kodim.^{*}

Para pemimpin milisi juga diberi status setengah resmi di dalam badan-badan negara yang bertanggung jawab untuk urusan politik dan keamanan. Para pemimpin milisi secara rutin diundang ke berbagai rapat dan penjelasan dengan pejabat-pejabat TNI, Polri, dan sipil. Sebagian dari pertemuan ini bersifat rahasia, tetapi banyak yang bersifat publik. Ketika ditanya mengenai pertemuan-pertemuan semacam itu, para pejabat pemerintah dan militer kadang-kadang menyatakan bahwa mereka bermaksud mendesak milisi untuk menghentikan tindakan-tindakan di luar hukum. Namun, para peserta dan saksi pertemuan tersebut memberikan laporan yang konsisten kepada UNAMET bahwa tujuan umum dari pertemuan-pertemuan tersebut adalah untuk menyampaikan rencana strategis dan taktis untuk tindak kekerasan yang terencana—termasuk pembakaran rumah, pemukulan, dan pembunuhan—terhadap para pendukung kemerdekaan.

Selain pertemuan tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya, pada 1999 ada sejumlah pertemuan antara para perwira tinggi militer dan para pemimpin milisi. Misalnya, pada Maret 1999 Mayor Jenderal Adam Damiri tercatat menghadiri satu pertemuan para pemimpin kelompok pro-otonomi dan milisi di sebuah hotel mewah di Bali, dan mengatakan kepada mereka bahwa Indonesia “100 persen di belakang mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka.”[†] Di markas

dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book on Political Affairs and Human Rights in East Timor*, November 1999.

* Lihat: Dandim 1627/Dili kepada Danrem Up. Kasi Intel Rem 164/WD, dan lain lain. Telegram rahasia No. STR/137/1999, 21 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #30).

† Dan Murphy, “Spotlight: School’s Out,” *Far Eastern Economic Review*, 23 September 1999.

Korem pada 18 Juni, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Brigadir Jenderal Glenny Kairupan, Kolonel Tono Suratman, dan beberapa pemimpin milisi bertemu untuk membahas perincian rencana darurat untuk memengaruhi pemungutan suara dan menciptakan kekacauan kalau pihak prokemerdekaan menang.^{*} Pertemuan tingkat tinggi lebih lanjut dilaporkan terjadi di Dili yang diadakan segera setelah pemungutan suara. Pertemuan yang dihadiri oleh Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, dan beberapa perwira tinggi TNI lainnya itu dilaporkan membahas rencana-rencana untuk menghancurkan infrastruktur vital dan membunuh tokoh-tokoh utama prokemerdekaan, kalau hasil penghitungan suara menunjukkan kemenangan prokemerdekaan.[†]

Harus diperhatikan bahwa pertemuan-pertemuan antara para pejabat militer, kepolisian, dan pemerintah sipil itu bukanlah sesuatu yang khas Timor-Leste. Secara bersama-sama, para pejabat ini merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk urusan keamanan yang ada pada setiap tingkat hierarki pemerintahan Indonesia. Badan yang dikenal dengan nama Muspida di tingkat kabupaten, dan dengan nama-nama yang berbeda pada tingkat-tingkat struktur pemerintah yang lebih rendah, mengadakan rapat secara rutin, baik di Timor-Leste maupun di Indonesia sendiri. Yang tidak lazim adalah di Timor-Leste pada 1999 para pemimpin milisi diundang untuk ambil bagian dalam rapat-rapat seperti itu. Akibatnya, walaupun menjadi penanggungjawab atas terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia, milisi digabungkan dalam aparat pembuatan keputusan resmi negara Indonesia.

Status resmi dari milisi, yang terbukti jelas dari partisipasi mereka dalam pertemuan-pertemuan semacam itu, dikonfirmasi lebih jauh oleh sejumlah dokumen resmi yang penting, yang ditandatangani bersama oleh pejabat Indonesia yang berwenang dan komandan milisi. Misalnya, ini mencakup satu perintah yang ditandatangani bersama oleh seorang Komandan Rayon Militer (Danramil) dan seorang komandan milisi tingkat kecamatan yang menginstruksikan kepada seorang pemimpin milisi lain dan anakbuahnya untuk menghadiri satu pertemuan pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan.[‡] Dokumen-dokumen itu juga mencakup setumpuk 'surat izin jalan' yang ditandatangani bersama oleh komandan milisi Eurico Guterres dan berbagai pejabat militer, kepolisian, dan pemerintah sipil di awal September 1999.[§] Di antara yang paling luarbiasa dari 'surat izin jalan' ini adalah satu surat yang ditandatangani oleh Eurico Guterres dan Kepala Staf Kodim Dili, Kapten Salmun

* Douglas Kammen, "The Trouble with Normal: The Indonesian Military, Paramilitaries, and the Final Solution in East Timor," dalam Benedict Anderson (penyunting), *Violence and the State in Suharto's Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program, 2001.

† "Maj. Gen. Zacky Anwar Makarim," *Masters of Terror*, <http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm>; dan "Sjafrie Sjamsuddin siapkan rencana darurat," *MateBEAN*, 1 September 1999.

‡ Perintah (No. 02/HMP/Kec.BB/VII/1999), bertanggal 30 Juli 1999, ditandatangani oleh Danramil Bobonaro, Sersan Poniran dan Komandan milisi Hametin Merah Putih di Bobonaro, Alberto Leite (Koleksi HRU, Doc. BOB#10).

§ Lihat misalnya, Koleksi SCU, Documents #42, 43, 53, 54, 57, dan 283-299.

Manafe.* Dokumen ini luarbiasa karena memberikan izin perjalanan kepada Kapten Manafe dan keluarganya. Dengan kata lain, pada September 1999, bahkan Kepala Staf Kodim membutuhkan dan terbukti menerima otoritas legal seorang komandan milisi dalam urusan keamanan.

Singkatnya, bukti-bukti yang disampaikan di dalam bab ini mengajukan dukungan kuat untuk kesimpulan bahwa milisi bukanlah badan independen yang bertindak di luar jangkauan negara Indonesia, tetapi kenyataannya dibentuk, didukung, dan diarahkan oleh pihak-pihak berwenang Indonesia. Lebih jauh, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa dukungan kepada milisi tidaklah sekadar disediakan oleh sejumlah kecil 'oknum' di dalam TNI, tetapi merupakan bagian dari kebijakan resmi, dan mendapatkan dukungan dari sebagian pejabat tertinggi dan paling berkuasa di Indonesia. Kesimpulan-kesimpulan ini didasarkan pada tiga temuan utama berikut ini.

Pertama, milisi yang menyebabkan kekacauan pada 1999 bukanlah kelompok yang baru. Sebaliknya, mereka itu merupakan kelanjutan dari strategi politik dan militer yang sudah mapan dan telah diterapkan oleh angkatan darat Indonesia di Timor-Leste sejak invasi pada 1975. Kenyataannya, sebagian dari pasukan milisi yang aktif pada 1999 telah dimobilisasi oleh angkatan bersenjata Indonesia pada saat invasi, sementara sebagian yang lain telah dibentuk oleh para perwira Angkatan Darat dalam dasawarsa 1980-an dan 1990-an. Selama 24 tahun pendudukan Timor-Leste, kelompok-kelompok tersebut dilatih, dipasok, dan dibina oleh Angkatan Darat Indonesia, dan menggunakan taktik-taktik yang sebenarnya sama dengan yang terlihat pada 1999. Pola historis ini menyediakan dasar yang sangat kuat untuk meragukan pernyataan pemerintah Indonesia bahwa kelompok-kelompok milisi tersebut muncul secara spontan dan bertindak sendiri pada 1999.

Kedua, pejabat-pejabat tinggi militer di Dili, Denpasar, dan Jakarta, secara aktif terlibat dalam pembentukan kelompok-kelompok milisi baru, dan dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka sejak pertengahan 1998 sampai dengan 1999. Bukti tentang berlanjutnya keterlibatan pihak berwenang didapatkan dari kesaksian mantan pemimpin-pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia, dan dari komunikasi rahasia antara para pejabat sipil dan militer Indonesia pada 1998 dan 1999. Bukti ini menunjuk pada para pejabat tinggi, yang mencakup Jenderal Wiranto, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Adam Damiri, Kolonel Tono Suratman, dan Mayor Bambang Wisnumurty.

Terakhir, ada bukti yang tak terbantahkan bahwa milisi-milisi tersebut diberi kedudukan legal dan politik resmi baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh pihak berwenang militer. Pernyataan-pernyataan publik yang mendukung milisi, yang dibuat oleh sejumlah pejabat, merupakan ungkapan tentang pengakuan dan dukungan resmi negara kepada kelompok-kelompok tersebut. Pernyataan-pernyataan itu juga bisa dipandang sebagai mendorong, dan bahkan memicu, kelompok-kelompok milisi

* Lihat: Kepala Staf Kodim 1627 (Kapten Salmun Manafe) dan Wakil Panglima PPI (Eurico Guterres), Surat Ijin Jalan, No. SIJ/14/IX/1999, 3 September 1999 (Koleksi SCU, Doc #53).

untuk melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Dengan dasar-dasar itu, bisa diajukan pendapat bahwa milisi adalah tangan resmi aparat politik dan keamanan Indonesia, dan bahwa tindakan-tindakan mereka oleh karena itu merupakan tanggung jawab langsung dari pihak-pihak berwenang Indonesia. Lebih lanjut, kedudukan legal milisi bukanlah sekadar bersifat teoretis, tetapi dikonfirmasi oleh pengikutsertaan secara tetap para pemimpin milisi di dalam pembahasan dan pengambilan keputusan pejabat-pejabat Indonesia dalam bidang politik dan keamanan di semua tingkatan. Jadi, baik dalam hukum dan dalam praktik, milisi bertindak dengan pengesahan penuh pihak-pihak berwenang Indonesia.

Milisi: Perekrutan, pelatihan, operasi, dan senjata

Hubungan antara milisi dengan TNI dan pejabat-pejabat Indonesia lainnya juga jelas terbukti dalam pola perekrutan, pelatihan, operasi, dan akses milisi pada senjata. Pola-pola itu signifikan karena menunjukkan bahwa milisi bukanlah entitas independen yang berada di luar kontrol pihak berwenang, seperti yang diklaim oleh pejabat-pejabat Indonesia, tetapi ada dan bertindak sesuai dengan arahan dan prosedur TNI. Lebih daripada itu, pola-pola tersebut melibatkan TNI, termasuk sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, dalam pelaksanaan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh milisi.

Perekrutan dan keanggotaan

Keterlibatan langsung TNI dengan milisi terungkap dalam pola perekrutan dan keanggotaan milisi pada 1999. Para perwira dan prajurit TNI secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam perekrutan anggota milisi, yang kadangkala dilakukan dengan pemaksaan. Sama pentingnya, perwira dan prajurit TNI bertugas sebagai pemimpin milisi dan menyamar sebagai milisi, sehingga membuat perbedaan antara TNI dan milisi menjadi benar-benar tanpa arti.

Anggota-anggota milisi berasal dari kelompok yang beragam dan menjadi terlibat di dalam milisi karena berbagai alasan. Sebagian bergabung dengan kelompok milisi karena keinginan sendiri. Mereka mencakup orang-orang yang pernah berjuang di pihak Indonesia sejak 1975, yang keluarga atau kerabatnya dibunuh oleh partai kemerdekaan, Fretilin, atau yang relatif hidup mapan di bawah kekuasaan Indonesia. Anggota-anggota yang lain direkrut secara langsung dari kelompok-kelompok kriminal yang terlibat dalam lingkaran-lingkaran perjudian, jasa perlindungan, dan sebagainya, atau karena mereka tergoda oleh kemungkinan menggunakan senjata dan memiliki kekuasaan kotor atas pihak yang lain.

Namun sejumlah besar anggota milisi bergabung oleh karena pemaksaan sebagai bagian dari usaha perekrutan resmi yang sistematis yang digerakkan sejak awal 1999

dalam konteks kampanye ‘sosialisasi’ pro-otonomi. Di setiap kabupaten, pejabat-pejabat militer dan pemerintah menetapkan target mengenai jumlah anggota milisi yang harus direkrut. Biasanya, targetnya adalah sekitar sepuluh orang laki-laki untuk setiap desa. Pencapaian target ini merupakan tanggung jawab camat dan kepala desa, namun sesuai dengan pola historis yang diuraikan dalam Bab 6, para perwira TNI selalu terlibat.

Berbicara kepada para wartawan di awal 1999, Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Supadi mengatakan bahwa militer telah merekrut sekitar 1.200 orang milisi, dan bahwa perekrutan tersebut dijadwalkan terus berlanjut hingga Maret.* Tokoh Timor-Leste mantan pendukung Indonesia, Tomás Gonçalves, menyatakan bahwa perwira-perwira dari Satgas Tribuana Kopassus berperan sangat penting dalam perekrutan. Berbicara di awal 1999, ia mengatakan:

“Orang-orang itulah yang merekrut milisi—mereka melakukan pemaksaan. Jika mereka tidak mau, pada malam hari mereka diambil dan dibunuh. [Mereka yang bergabung] diberi latihan militer, senjata, dan diindoktrinasi.”†

Walaupun tidak semua yang menolak menjadi milisi dibunuh, pemaksaan dan ancaman merupakan unsur umum dalam usaha perekrutan. Pada pertemuan-pertemuan umum dan dalam kampanye dari rumah ke rumah yang dilaksanakan di awal 1999, anggota-anggota milisi dan prajurit-prajurit TNI menekan orang untuk bergabung. Yang menolak atau melawan, apapun sebabnya, dituduh bersikap prokemerdekaan dan dijadikan sasaran pembalasan dendam. Banyak dari yang menolak, rumahnya dibakar dan keluarganya diancam, dan beberapa dibunuh. Kalau kepala desa atau camat tidak bersemangat membentuk kelompok milisi, mereka dijadikan sasaran ancaman dan pembalasan oleh kelompok-kelompok milisi dan para prajurit TNI dari wilayah-wilayah tetangga.

Seperti kesaksian seorang mantan milisi: “Mereka memanggil kami, mencatat nama kami, dan berkata, ‘kalian harus bergabung dalam kelompok ini.’ Kami bilang, ‘untuk apa kami bergabung?’ Mereka bilang, ‘Kalau kalian menolak, kalian akan lihat apa yang terjadi.’ Sehingga kami menjadi takut dan kami bergabung.”‡ Hal yang sama, seorang istri dari seorang laki-laki yang melarikan diri dari desanya setelah menolak bergabung dengan milisi bersaksi: “Mereka datang ke desa kami dan menghancurkan segalanya. Mereka membunuh ayam-ayam kami, mereka ambil apa yang bisa mereka bawa dan menjualnya. Dan mereka bilang, kalau [mereka tidak dapat] menemukan suami [saya] mereka akan datang lagi dan memukuli saya dan anak-anak saya sampai mati.”§

* “Lt. Col. Supadi,” *Masters of Terror*, <http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm>

† Dikutip dalam “Timor Coup Planned,” *The Age*, 22 Juni 1999.

‡ Dikutip dalam SBS, *Dateline*, “Timor Terror Fund,” 16 Februari 2000, transkripsi, halaman 34.

§ Dikutip dalam ABC, *Four Corners*, “A Licence to Kill,” 15 Maret 2000, transkripsi, halaman 6.

Di samping mereka yang direkrut dengan tekanan, dan yang bergabung secara sukarela, ada sejumlah 'orang milisi' yang ternyata samasekali bukan orang sipil Timor-Leste, tetapi prajurit angkatan darat Indonesia yang berpakaian seperti milisi setempat. Khususnya dalam periode pra-UNAMET dan pasca-pemungutan suara, kerap ada laporan tentang orang-orang milisi yang sesungguhnya adalah prajurit TNI berpakaian sipil. Berdasarkan kesaksian dari para korban perkosaan pada 1999, para Pelapor Khusus PBB pada akhir 1999 melaporkan bahwa:

“... pada banyak kesempatan tidak bisa dibuat pembedaan antara anggota milisi dengan anggota TNI, karena sering mereka adalah orang yang sama dengan seragam yang berbeda.”

Rekaman film, yang diambil pada 1999, yang menunjukkan seorang prajurit TNI sedang berganti 'kostum' milisi dan memasang rambut palsu panjang 'milisi' memberikan dukungan pada sangkaan bahwa setidaknya sebagian dari anggota milisi tidaklah seperti yang terlihat.

Dalam beberapa kasus, pihak berwenang Indonesia mengakui bahwa anggota milisi sebenarnya adalah perwira TNI. Pada Agustus 1999, pejabat UNAMET menulis surat kepada kepala Satuan Tugas, Agus Tarmidzi dan kepada Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, untuk mengajukan keberatan tentang keterlibatan anggota TNI dalam kegiatan milisi. Di antara anggota TNI yang mereka sebut namanya adalah Sersan Domingos dos Santos dan Sersan Julião Gomes, yang keduanya bertugas di Kodim Bobonaro.[†] Dalam jawabannya, Makarim mengakui bahwa dua orang tersebut memang anggota TNI dan anggota milisi DMP. Sebagai usaha untuk mengalihkan kritik UNAMET, Makarim menyatakan, dengan tidak benar, bahwa dua tentara tersebut telah dikurung di barak.[‡]

Sejumlah dokumen militer dan pemerintah dari akhir 1998 dan 1999 mengonfirmasikan bahwa terdapat perangkapan yang besar di dalam keanggotaan milisi dan TNI, dan bahwa sebagian anggota milisi kenyataannya adalah prajurit TNI. Misalnya, satu dokumen dari akhir 1998, menyebutkan 49 anggota kelompok milisi Makikit yang bermarkas di Viqueque, mengindikasikan bahwa enam orang dari semua yang terdaftar sebenarnya adalah prajurit TNI dari Batalion Infanteri 328 TNI.[§] Sepucuk surat dari pemimpin milisi Eurico Guterres kepada Dandim Dili menunjukkan bahwa penempatan personel TNI di dalam kesatuan-kesatuan milisi adalah hal yang biasa. Surat tersebut, bertanggal 22 Juni 1999, meminta Dandim Dili mengizinkan seorang bintanga intelijen TNI

* United Nations, *Situations of Human Rights in East Timor*, 10 Desember 1999, halaman 12.

† Dua orang yang disebut namanya itu tercantum dalam surat Ian Martin kepada Agus Tarmidzi, bertanggal 19 Agustus 1999. Dikutip dalam Greenlees and Garran, *Deliverance*, halaman 184.

‡ Komunikasi pribadi, Ian Martin, 1 Juni 2003.

§ Lihat: Kodim 1630, "Daftar: Nominatif Pemegang Senjata Team Makikit," tidak bertanggal, ditemukan di Kodim 1630 pada 28 November 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #4).

(Sersan Satu Elizario da Cruz P.) untuk bertugas pada Aitarak untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.*

Dokumen lain menegaskan pola-pola ini dan membuktikan bahwa sejumlah kelompok “milisi” kenyataannya adalah kesatuan khusus TNI. Satu daftar resmi tentang 91 anggota kelompok milisi Saka (juga dikenal sebagai Pusaka), bertanggal 3 Februari 1999, menunjukkan bahwa semuanya adalah prajurit TNI, dengan pangkat dan nomor pokok militer, dan bahwa kesatuan itu secara resmi disebut ‘kompi khusus’ Kodim 1638/Baucau. Dengan kata lain, Saka samasekali bukan suatu pasukan sipil sukarela, tetapi satu kesatuan khusus TNI. Lebih jauh, dokumen yang sama menunjukkan bahwa komandan kompi tersebut, Joanico Cesário Belo—yang juga Komandan Sektor A PPI—kenyataannya adalah seorang bintara Kopassus, dengan pangkat Sersan Satu.

Akhirnya, sejumlah dokumen internal milisi Aitarak dengan jelas menunjukkan bahwa personel TNI adalah anggota-anggota milisi ini dan bahwa mereka digaji. Satu dokumen semacam itu, dibuat oleh bendaharawan Aitarak dan bertanggal 24 Agustus 1999, adalah ringkasan mengenai gaji yang sudah dibayarkan kepada para anggota kelompok. Di antara mereka yang dibayar adalah 96 orang yang anggota TNI atau pegawai sipil pemerintah daerah.†

Keterlibatan langsung pasukan dan perwira TNI di dalam perekrutan paksa untuk keanggotaan milisi di tahun 1999, serta perangkapan keanggotaan milisi dan TNI yang signifikan dan mendapatkan dukungan resmi, meninggalkan sedikit ruang untuk keraguan tentang hubungan milisi-TNI. Hal ini juga memperkuat kesimpulan bahwa pimpinan TNI mengemban tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan-pasukan milisi.

Pelatihan

Walaupun terdapat penolakan resmi yang sangat kuat, tidak ada keraguan bahwa TNI memberikan pelatihan kepada milisi secara teratur.‡ Seperti bukti perekrutan paksa dan keanggotaan rangkap dengan milisi, bukti mengenai latihan dengan jelas menunjukkan keterlibatan TNI dalam kekerasan milisi.

Dalam suatu keterusterangan pihak resmi yang jarang terjadi, di awal Januari 1999 Kepala Staf Korem, Letnan Kolonel Supadi, dilaporkan berkata kepada para wartawan bahwa militer sebenarnya memberikan latihan selama dua minggu kepada

* Lihat: Komandan Komando Pasukan Aitarak Sektor B (Eurico Guterres) kepada Komandan Kodim 1627/Dili dan lain-lain. Surat No. 46/PD/MK-AT/VI/1999 mengenai “Permohonan Dispensasi,” 22 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #31).

† Menurut laporan tersebut, 96 orang itu masing-masing dibayar Rp120.000. Lihat: Memo dari Bendahara kepada Eurico Guterres tentang anggaran Aitarak, 28 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #79).

‡ Bersaksi di hadapan sidang Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta, pada Oktober 2002, Kolonel Tono Suratman secara tegas membantah bahwa TNI pernah memberikan latihan kepada milisi Timor-Leste. “Kami tidak pernah mendidik atau melatih mereka,” katanya. Lihat “Tono Bantah Keterlibatan TNI dan Polri,” *Media Indonesia*, 23 Oktober 2002.

milisi baru.’ Pengakuannya tentang peran TNI sudah dikonfirmasi oleh berbagai laporan dari para pengamat waktu itu, dan dari bukti kesaksian yang substansial yang dikumpulkan sejak 1999. Namun peran sangat penting TNI di dalam pelatihan milisi, paling meyakinkan ditunjukkan oleh rekaman dokumenter.

Ada empat dokumen yang secara khusus mengungkapkan hal tersebut. Pertama adalah satu lembar telegram rahasia dari Danrem Kolonel Tono Suratman, bertanggal 13 April 1999, yang memerintahkan semua Dandim untuk melaksanakan tindakan kewaspadaan dan disiplin yang lebih besar dalam melatih satuan-satuan Ratih (yaitu milisi) di kabupaten mereka masing-masing. Dengan demikian, dokumen itu menegaskan bahwa pelatihan kelompok-kelompok milisi dilakukan secara rutin, dan berada dalam pengawasan dan kontrol dari pejabat militer yang paling tinggi di Timor-Leste, Kolonel Tono Suratman. Dalam bagian yang relevan dari telegram tertanggal 13 April, Suratman memerintahkan semua Dandim:

“Supaya melaksanakan pengamanan kegiatan penyenggaraan pendidikan dan latihan Ratih di pendidikan dan latihannya masing-masing agar melaksanakan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar”; dan “Menekankan tata-tertib disiplin dalam rangka mencegah terjadinya kerugian secara fisik maupun nonfisik di lingkungan dan di luar satuan pendidikan.”[†]

Penting bahwa telegram Danrem tersebut didasarkan pada satu perintah dari Panglima Daerah Militer IX, Mayor Jenderal Adam Damiri (No. STR/90/1999, tanggal tidak disebutkan), yang mengonfirmasikan bahwa latihan semacam itu dilakukan dengan sepengetahuannya, dan dengan perintahnya. Lebih jauh, telegram Danrem tertanggal 13 April 1999 mengutip, untuk pengesahan, satu perintah tahun 1996 dari Kepala Staf Angkatan Darat mengenai prosedur perekrutan dan pelatihan Ratih. Dengan demikian, telegram tersebut mengonfirmasikan bahwa pelatihan milisi di tahun 1999 diatur melalui peraturan dan prosedur yang sudah tetap yang dikeluarkan oleh jajaran TNI yang paling tinggi. Bagian yang relevan dari telegram Danrem tersebut memerintahkan kepada semua Dandim untuk:

“Menekankan pembuatan Rencana Pengamanan dalam setiap penyusunan Rencana Latihan Ratih sesuai surat telegram KASAD No. ST/1156/96 tanggal 26 Nop 1996”; dan “Memperhatikan semua sarana pendukung yang digunakan agar disesuaikan dengan persyaratan/peraturan dan prosedur yang berlaku.”[‡]

Dokumen kedua yang relevan dengan persoalan pelatihan adalah satu lembar telegram rahasia, bertanggal 16 April 1999. Telegram ini dikeluarkan oleh Dandim

* “Lt. Col. Supadi,” *Masters of Terror*, <http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc/htm>

† Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/44/1999, 13 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #10).

‡ Ibid.

Dili kepada semua Danramil yang berada di bawah komandonya. Dengan merujuk pada telegram Danrem bertanggal 13 April 1999, telegram Dandim mengingatkan semua Danramil tentang “peraturan dan prosedur” yang berlaku untuk mengatur pelatihan Ratih. Dengan cara demikian, telegram tersebut memberikan konfirmasi tambahan bahwa pelatihan untuk milisi merupakan tugas rutin TNI, yang dilaksanakan di seluruh Timor-Leste setidak-tidaknya sampai pada tingkat Koramil, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sudah tetap.^{*}

Dokumen ketiga yang penting adalah satu laporan intelijen TNI dari Kodim Liquiçá, bertanggal 18 April 1999. Dokumen ini melaporkan, antara lain, tentang kunjungan Danrem Kolonel Tono Suratman ke kota Liquiçá dan Maubara pada pertengahan April. Dokumen ini tidak hanya mengonfirmasikan bahwa TNI secara aktif terlibat dalam pelatihan milisi BMP pada waktu itu, tetapi juga bahwa Kolonel Tono Suratman berperan langsung di dalamnya. Bagian yang relevan dari laporan itu terbaca:

“Pada 16 April pukul 14.00 WITA [Waktu Indonesia Tengah] Dan Rem 164/WD dan rombongan tiba di Makodim 1638/Lqs kemudian melaksanakan kunjungan di Koramil 1638-03/Maubara dalam rangka memberikan pengarahan kepada ± 500 anggota Besi Merah Putih ...”[†]

Penting diperhatikan bahwa pengarahan yang diberikan oleh Tono Suratman kepada BMP di Maubara terjadi hanya dua minggu setelah milisi yang sama melancarkan serangan kekerasan terhadap Gereja Liquiçá, di mana belasan orang terbunuh. Penting juga ditegaskan bahwa Kolonel Tono Suratman memberikan pengarahan kepada para anggota milisi ketika mereka berkumpul di sebuah instalasi resmi TNI, markas Koramil di Maubara.[‡]

Dokumen keempat adalah satu laporan situasi harian, bertanggal 20 Mei 1999, dari Kodim 1631/Manatuto kepada kepala Seksi Intelijen Korem, Mayor Bambang Wisnumurty, dan salinannya diberikan kepada Komandan Satgas Tribuana.[§] Laporan itu antara lain menyatakan secara eksplisit bahwa pada 17 Mei 1999, dua orang perwira senior TNI telah memberikan “pengarahan” kepada para anggota milisi Morok yang bermarkas di Manatuto. Dua orang perwira tersebut adalah

.....
^{*} Kepala Staf Kodim 1627 (Kapten Salmun Manafe) atas nama Dandim 1627, kepada Danramil 01 sampai dengan 04 dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/198/1999, 16 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #13).

[†] Perwira Seksi Intelijen Kodim 1638 kepada Kepala Seksi Intelijen Korem 164/WD, Dan Sektor B, dan lain-lain, “Laporan Harian Seksi Intelijen Dim 1638/Lqs Periode tgl. 16 s/d 17 April 1999,” 18 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #11).

[‡] Mungkin juga penting bahwa kunjungan Tono Suratman terjadi tepat satu hari sebelum satu tim dari Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat tiba di kabupaten itu untuk menyelidiki pembantaian di Gereja Liquiçá.

[§] Perwira Seksi Intelijen (Kapten Dulhadjar) Kodim 1631/Manatuto kepada Kasi Intel Korem 164/WD dan lain-lain. Laporan Harian Intelijen, 20 Mei 1999. (Koleksi Yayasan HAK, Doc #24.)

Komandan Sektor A, Kolonel Sunarko, dan Komandan “Sub-Sektor Manatuto” yang tidak disebutkan namanya.* Dengan demikian di samping mengonfirmasikan bahwa TNI terlibat dalam pelatihan milisi, laporan ini menyatakan dengan jelas tentang peran komandan sektor yang berpangkat tinggi dalam pelatihan tersebut.† Laporan ini juga menunjukkan bahwa para perwira senior intelijen dan Kopassus, terutama Mayor Bambang Wisnumurty di Korem dan Komandan Satgas Tribuana, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, sepenuhnya mengetahui situasi tersebut.

Secara bersama-sama, dokumen-dokumen ini mengonfirmasikan bukti kesaksian yang sangat banyak bahwa pelatihan milisi adalah unsur standar dari kegiatan TNI di Timor-Leste pada 1999. Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan bahwa pelatihan tersebut diatur oleh seperangkat peraturan dan prosedur yang sudah tetap, dan sesuai dengan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh perwira-perwira pada jajaran tertinggi hierarki militer, termasuk Danrem Kolonel Tono Suratman, Pangdam IX Mayor Jenderal Adam Damiri, dan Kepala Staf Angkatan Darat.

Operasi

Juga ada bukti penting, baik dalam bentuk kesaksian maupun dokumenter, bahwa pada 1999 kelompok-kelompok milisi menerima dukungan operasional langsung dari TNI. Dukungan operasional tersebut bentuknya bermacam-macam. Dalam sejumlah kasus, khususnya pada periode pra-UNAMET dan pasca-pemungutan suara, para prajurit TNI ditugaskan bersama milisi dalam operasi-operasi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam kasus-kasus lainnya, paling umum terjadi selama periode UNAMET, milisi diperbolehkan menggunakan pangkalan-pangkalan dan pos-pos TNI sebagai tempat persiapan untuk operasi-operasi mereka.

Operasi bersama TNI-milisi memiliki dua ciri penting. Pertama, para prajurit TNI biasanya mengambil tempat di belakang pasukan milisi, menembakkan senjata mereka hanya ketika milisi berada dalam bahaya. Kedua, dalam kasus pembunuhan, para prajurit dan perwira TNI umumnya memimpin penyelenggaraan pelenyapan mayat.

Satu contoh yang paling jelas dari pola ini adalah pembantaian 6 April di Gereja Liqueiçá. Dalam kasus tersebut, ratusan anggota milisi BMP dan Aitarak menyerang sekelompok orang yang mengungsi di kompleks gereja di Liqueiçá dan membunuh belasan orang. Prajurit pasukan-pasukan TNI, Polri, dan Brimob yang bersenjata lengkap hadir selama terjadinya serangan itu. Para prajurit ini bukan saja hanya

.....
* Ini mungkin adalah Letnan Kolonel Nyus Rahasia, seorang perwira Kopassus yang disebutkan berada di Manatuto mulai pertengahan Mei hingga pertengahan Juni untuk mengoordinasikan latihan cara militer untuk milisi di sana. (Lihat Ringkasan Distrik: Manatuto.)

† Beberapa dokumen lain mengonfirmasikan peran komando-komando Sektor dalam melatih milisi. Salah satunya adalah perintah bertanggal 27 April 1999 dari Danrem Kolonel Tono Suratman kepada Komandan Sektor A dan Sektor B, yang menginstruksikan mereka untuk sementara menghentikan apel rutin pagi hari pasukan-pasukan pro-integrasi (yaitu milisi). Lihat: Danrem 164/WD kepada Dan Sektor A dan B. Telegram rahasia, 27 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #18).

diam tidak melakukan apapun untuk mencegah serangan, atau menghentikannya ketika sedang terjadi, tetapi sebagian besar kesaksian menyatakan bahwa mereka justru membantu pelaksanaan penyerangan. Seorang anggota BMP yang terlibat dalam penyerangan, di kemudian hari mengatakan kepada UNAMET bahwa mayat-mayat korban diangkut pergi dengan menggunakan sedikitnya lima truk. Perlu diperhatikan, satu laporan rahasia Polri tentang insiden itu mencatat bahwa hubungan erat antara TNI dan milisi menjadi halangan bagi penyelidikan Polri.’ (Lihat studi kasus: Pembantaian Gereja Liquiçá.)

Dengan mulai bertugasnya UNAMET pada Juni 1999, dan datangnya ratusan wartawan dan pengamat, TNI berusaha menghindari terlihat sedang bersama milisi.[†] Perubahan taktik ini membuat turunnya laporan tentang operasi bersama TNI-milisi setelah awal Juni, dan mungkin bukan kebetulan, membuat turunnya tingkat pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste.

Akan tetapi, operasi bersama TNI-milisi tetap berlangsung. Sebagai contohnya:

- Di pertengahan Juni 1999, para pejabat UNAMET menyaksikan TNI dan pasukan-pasukan milisi secara paksa mengungsikan penduduk beberapa desa di Liquiçá, dan membakar seluruh isi rumah mereka.[‡]
- Di akhir Juni, perwira-perwira Komando Distrik Militer Bobonaro terlihat sedang mengoordinasikan suatu serangan yang dilakukan oleh anggota-anggota milisi Dadurus Merah Putih terhadap markas UNAMET di kota Maliana. (Lihat studi kasus: Penyerangan terhadap UNAMET Maliana.)
- Di pertengahan Agustus, personel UNAMET di Viqueque menyaksikan anggota TNI dan Polri mengoordinasikan dan bergabung dengan milisi-milisi setempat dalam satu serangan terhadap pemuda-pemuda prokemerdekaan, yang mengakibatkan sedikitnya dua orang meninggal.[§]
- Pada hari pemungutan suara, 30 Agustus 1999, sekelompok milisi yang disertai prajurit-prajurit TNI menikam dan membunuh dua anggota staf UNAMET di dekat tempat pemungutan suara di Boboe Leten, Kabupaten Ermera. Investigasi yang dilakukan kemudian mengungkapkan bahwa Komandan Rayon Militer mengambil bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan. (Lihat studi kasus: Pembunuhan staf UNAMET di Boboe Leten.)

* Dalam satu bagian yang berjudul “Hambatan/kendala yang dihadapi,” laporan itu menyatakan dengan teras-terang bahwa “Dukungan ABRI khususnya TNI-AD terhadap kelompok Pro Integrasi sangat mempengaruhi proses penyidikan.” Kepolisian Daerah Timor Timur, Direktorat Reserse, “Laporan Penanganan Kasus Liquiçá,” 15 April 1999. Dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book on Political Affairs and Human Rights in East Timor*, Dili, November 1999.

† Perubahan pendekatan ini dikonfirmasi oleh satu komunikasi radio, yang disadap oleh intelijen Australia pada 1 Juni 1999. Dalam pembicaraan radio itu, Komandan Korem Kolonel Tono Suratman dilaporkan mengatakan kepada pemimpin milisi, Eurico Guterres: “Jangan berhubungan langsung dengan saya. Hubungi saya melalui [Kepala Seksi Intelijen Korem, Mayor] Bambang [Wisnumurty].” *Sydney Morning Herald*, “Silence over crime against humanity,” 14 Maret 2002.

‡ Untuk laporan terperinci tentang insiden tersebut lihat UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

§ Untuk perincian lebih lanjut, lihat UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

Ada banyak kesaksian dan bukti dokumenter penting yang menunjukkan bahwa pasukan-pasukan TNI membolehkan milisi mempergunakan pangkalan-pangkalan dan pos-pos TNI sebagai tempat persiapan operasi-operasi mereka. Salah satu bukti tersebut adalah telegram rahasia bertanggal 18 April 1999. Telegram itu dari Dandim Dili Letnan Kolonel Endar Priyanto kepada Danrem Kolonel Tono Suratman. Isinya melaporkan bahwa lebih daripada 250 orang anggota milisi Aitarak berkumpul di dalam markas Kompi B Batalion 744 di Dili ketika berlangsung operasi ‘pembersihan’ yang berakibat sedikitnya seorang pemuda prokemerdekaan meninggal dunia. Laporan itu terbaca:

“Pada 18 April 1999 pukul 13.15 WITA sebagian pasukan Aitarak yang melaksanakan pembersihan selesai, mereka kembali ke Kompi B Yonif 744/SYB, bergabung dengan yang lain, selanjutnya kembali ke Tropical...”

Penting untuk diingat bahwa tingkat kerjasama—dan kesepakatan diam-diam—TNI ini terjadi sehari setelah Aitarak bergerak melancarkan kekerasan di seluruh Dili, di mana mereka membunuh sedikitnya 12 orang sipil yang mengungsi di rumah Manuel Carrascalão. (Lihat studi kasus: Pembantaian di rumah Carrascalão.)

Pola yang sama—fasilitas dan tempat-tempat TNI disediakan kepada milisi—terbukti di seluruh Timor-Leste. Di Lautém, misalnya, Kopassus berbagi markas dengan kelompok milisi Tim Alfa, dan memberikan dukungan logistik dan transportasi kepada kelompok tersebut. (Lihat ringkasan kabupaten: Lautém.) Di sekurangnya dua kecamatan di Kabupaten Covalima, markas milisi Laksaur bertempat di dalam markas Koramil.[†] Di Liquiçá, seperti yang sudah kita bahas, Koramil di Kecamatan Maubara berfungsi ganda sebagai markas milisi BMP. (Lihat ringkasan kabupaten: Liquiçá.) Contoh-contoh semacam itu dapat disebutkan untuk setiap kabupaten di Timor-Leste.

Pola operasi gabungan TNI-milisi berubah lagi dalam periode setelah pemungutan suara. Dengan UNAMET berada di bawah pengepungan di kantor induknya di Dili, dan hampir semua pengamat dan wartawan telah meninggalkan Timor-Leste, TNI bebas terlibat dalam tindakan-tindakan kekerasan, baik secara langsung maupun bersama dengan milisi. Dalam konteks inilah terjadi beberapa contoh terjelas operasi gabungan TNI-milisi. Ini termasuk, di antara banyak kasus yang lain, pembantaian terhadap sedikitnya 40 orang dan kemungkinan sebanyak 200 orang di Gereja Suai pada 6 September; pembantaian terhadap sedikitnya 14 orang pengungsi di kantor Kepolisian Resor Maliana pada 8 September; dan eksekusi sistematis terhadap sedikitnya 82 orang di Kecamatan Oesilo di Kabupaten Oecussi pada waktu antara

* Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/202/1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #17).

† Lihat Timor Leste, Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Herman Sedyono et al., Dili, 7 April 2003, halaman 12.

8 dan 10 September. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Gereja Suai; Pembantaian di Kantor Polisi Maliana, dan Pembantaian di Passabe dan Maqulelab).

Saksi-saksi kekerasan pada masa setelah pemungutan suara juga telah bersaksi bahwa prajurit-prajurit TNI secara rutin tidak melakukan apa-apa untuk mencegah atau menghentikan milisi melaksanakan tindakan kekerasan. Satu contoh yang jelas dari pola ini terjadi tepat di depan hidung UNAMET. Pada 10 September, tiga hari setelah pengumuman Keadaan Darurat, staf UNAMET melihat sekelompok milisi bersenjata mendekati halaman sekolah di sebelah kompleks UNAMET dan mulai menyerang orang-orang yang berkumpul di sana. Sekitar 200 prajurit Kostrad dan Polri siap tempur yang seharusnya melindungi tempat tersebut tidak hanya gagal menghentikan milisi, tetapi malah bergabung dengan milisi menghancurkan jendela mobil-mobil PBB dan menjarah atau mencuri kendaraan-kendaraan tersebut.⁷

Ketika seorang staf UNAMET bertanya kepada salah seorang prajurit Kostrad mengapa ia dan teman-temannya tidak menembak, atau setidaknya menangkap milisi, prajurit itu menjawab bahwa kesatuannya tidak mendapatkan perintah untuk melakukan hal tersebut. Dan ketika Jenderal Wiranto dihadapkan pada kenyataan semacam ini oleh delegasi Dewan Keamanan PBB yang berkunjung pada hari yang sama, ia membantah bahwa ada masalah dan bersikeras bahwa keadaan keamanan di Dili berada di bawah kendali.

Senjata: Bukti kesaksian

Sejumlah bukti paling jelas tentang hubungan TNI dengan milisi terletak dalam fakta bahwa perwira-perwira militer memasok milisi dengan senjataapi modern, dan membolehkan mereka membawa senjata-senjata lain yang bertentangan dengan hukum. Keterlibatan TNI di dalam pembagian senjata kepada milisi, dan penolakan mereka untuk menegakkan hukum yang melarang kepemilikan senjata, merupakan satu kasus yang jelas tentang keterlibatan pihak berwenang dalam tindakan-tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Lebih-lebih lagi kalau diingat bahwa komandan-komandan militer mengetahui penggunaan senjata-senjata itu—pengetahuan yang telah dikonfirmasi oleh bukti dokumenter.

Bukti yang paling awal bahwa senjata-senjata dibagikan kepada milisi datang dari pernyataan-pernyataan terbuka para perwira tinggi TNI, dan dari dua pemimpin penting milisi. Di awal 1999, Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Supadi mengatakan kepada para wartawan bahwa militer telah memasok senjata kepada milisi. “Bila kami tidak mempersenjatai mereka,” katanya, “akan ada banyak

.....
* Menurut satu dokumen internal TNI, kompleks UNAMET dijaga oleh satu kompi lengkap KOSTRAD (91 orang) dan 100 orang Polri, di bawah komando Kapten Infanteri Catur. Lihat: Dandim 1627/Dili (Letnan Kolonel Soedjarwo), “Data Kekuatan Pengamanan UNAMET dan Obyek Vital,” September 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #45). Untuk penjelasan terinci dari tangan pertama tentang peristiwa penyerangan 10 September, lihat UNAMET, Political Affairs Office, “Note on Militia Incursion into UNAMET Compound, 10 September 1999,” dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

korban di pihak kami. Lebih baik banyak korban di pihak mereka.” Kemudian pada Februari, Wakil Komandan Korem Kolonel Mudjiono, mengatakan kepada seorang wartawan bahwa senjataapi telah dibagikan kepada kelompok-kelompok prointegrasi agar mereka bisa melawan Falintil.[†] Panglima Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri juga mengatakan kepada media bahwa TNI telah membagikan senjata kepada milisi, walaupun ia menolak bahwa tujuan tindakan tersebut adalah untuk mendukung pihak prointegrasi.[‡] Di awal Februari, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, mengatakan bahwa Angkatan Darat mempersenjatai ‘Wanra’ untuk membantu TNI mengamankan Timor-Leste.[§] Pada pertengahan Februari, Kepala Pusat Penerangan TNI di Jakarta, Jenderal Sudrajat, menegaskan bahwa senjata memang telah dibagikan kepada milisi tetapi menegaskan bahwa “kami memberikan senjata hanya kepada yang dapat kami percaya.”[¶]

Pada saat yang kira-kira sama, pemimpin milisi Mahidi, Cancio Carvalho, mengatakan kepada para wartawan bahwa TNI telah memberikan 20 pucuk senapan otomatis SKS buatan Cina kepada kelompoknya di akhir Desember 1998, yang kemudian dipergunakan untuk melaksanakan sejumlah serangan mematikan terhadap desa-desa tetangga.^{**} Serangan-serangan tersebut dilaporkan termasuk satu serangan terhadap Desa Galitas, di Zumalai, pada 25 Januari 1999. Di dalam serangan tersebut sejumlah orang dibunuh, termasuk seorang perempuan yang sedang hamil dan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun^{††} (Lihat ringkasan kabupaten: Covalima.)

Berbicara kepada para wartawan segera setelah kejadian ini, Cancio Carvalho—yang, bisa diingat kembali, memiliki hubungan erat dengan Mahidin Simbolon, Kepala Staf Kodam IX—mengakui keterlibatan pribadinya dalam pembunuhan tersebut: “Serangan terjadi seperti ini. Saya menembak begini. Saya memimpin mereka dan kami menyerang dalam dua barisan. Saya perintahkan mereka untuk menembak dengan gaya menggantung, seperti ini. Perempuan itu tubuhnya hancur. Saya tidak memotongnya.” Ia juga berusaha menjelaskan mengapa perempuan tersebut dan para korban lainnya dijadikan sasaran: “Perempuan ini adalah istri komandan Falintil. Saya tidak tahu apakah orang tua itu pembuat kekacauan atau bukan.”^{‡‡}

* “Lt. Col. Supadi,” *Masters of Terror*, <http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm>.

† “Up in Arms,” *Far Eastern Economic Review*, 18 Februari 1999.

‡ Dikutip dalam East Timor International Support Center (ETISC), *Indonesia’s Death Squads: Getting Away with Murder*, Darwin: ETISC Occasional Paper No. 2, Mei 1999, halaman 12. Damiri membuat pernyataan yang sama beberapa saat sebelum serangan terhadap Gereja Liquiçá, yang menegaskan bahwa militer telah memasok senjata kepada “sejumlah terbatas” kelompok milisi. Lihat “Timor Needs No Foreign Soldiers,” *Indonesian Observer*, 5 April 1999.

§ “KSAD Jelaskan Soal Sipil Dipersenjatai,” *Media Indonesia*, 2 Februari 1999.

¶ Dikutip dalam ETISC, *Indonesia’s Death Squads*, halaman 13.

** “Crossbows and Guns in East Timor,” *Economist*, v. 350 n. 8106 (13 Februari 1999), halaman 40.

†† ABC, *Four Corners*, “A Licence to Kill,” 15 Maret 1999; dan ETISC, *Indonesia’s Death Squads*, halaman 12.

‡‡ ABC, *Four Corners*, “A Licence to Kill,” 15 Maret 1999, transkripsi halaman 10.

Kakak laki-laki Cancio Carvalho, Francisco Carvalho, seorang bekas sekretaris jenderal partai pro-Indonesia Apodeti, tidak ragu bahwa TNI telah membagikan senjata: “Senjata memang sudah diserahkan,” katanya saat itu, “semua orang tahu itu.” Sama halnya, pemimpin milisi Aitarak Eurico Gutteres mengonfirmasikan bahwa senjata telah dibagikan, tetapi menegaskan bahwa: “Saya diberi senjata bukan hanya untuk melindungi diri saya sendiri maupun orang-orang integrasi lainnya, tetapi juga untuk melindungi musuh-musuh integrasi.”[†]

Keterlibatan langsung pejabat tinggi TNI di dalam pembagian senjata dalam periode ini telah diringkaskan di dalam surat dakwaan terhadap delapan pejabat tinggi Indonesia yang dibuat oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste untuk Kejahatan Berat.[‡] Surat dakwaan tersebut secara langsung menyebut Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Kolonel Tono Suratman, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat dalam tindakan-tindakan ini. Bagian dari surat dakwaan tersebut yang relevan adalah sebagai berikut:

“19. Pada atau sekitar bulan Maret 1999, Kiki SYAHNAKRI bertemu dengan para pemimpin pro Indonesia Timor Leste di Markas Besar TNI di Jakarta. SYAHNAKRI memberitahukan kelompok tersebut bahwa TNI akan mendukung usaha pro-Indonesia dan bahwa MAKARIM bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan menjelang jajak pendapat. SYAHNAKRI memberitahukan mereka bahwa senjataapi telah dikirim ke Timor Leste dan ketika mereka kembali ke Dili, mereka seharusnya menghubungi SURATMAN untuk mengatur pembagian senjata.

...

23. Pada atau sekitar bulan Maret 1999, SUDRAJAT dan anggota lain dari TNI mengantarkan banyak senjata ke seorang pemimpin pro Indonesia Timor Leste. SUDRAJAT minta pemimpin Timor Leste tersebut untuk memberikan senjata-senjata kepada kelompok-kelompok milisi pro Indonesia.

24. Pada April 1999, MAKARIM memberitahukan para komandan TNI dan pemimpin pro Indonesia Timor Leste bahwa mereka seharusnya bekerja keras untuk otonomi karena kalau otonomi kalah, lebih banyak darah akan mengalir. Dia menawarkan kepada para pemimpin pro Indonesia Timor Leste penggunaan senjataapi otomatis dan menyuruh SURATMAN untuk mengatur pengambilan dan pembagian senjata-senjata tersebut.

* ABC, *Four Corners*, “A Licence to Kill,” 15 Maret 1999, transkripsi halaman 11.

† ABC, *Four Corners*, “A Licence to Kill,” 15 Maret 1999, transkripsi halaman 5.

‡ Timor Leste, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003.

25. Pada atau sekitar bulan April 1999, SURATMAN, setelah diminta oleh MAKARIM untuk menyediakan senjataapi otomatis kepada para pemimpin pro Indonesia Timor Leste, menyuruh bawahannya SUDRAJAT untuk mengatur pengambilan dan pembagian senjata-senjata tersebut.”

Berhadapan dengan meluasnya kecaman internasional atas pembantaian di Liquiçá dan Dili pada April 1999, para pejabat Indonesia mulai menyangkal bahwa senjata telah dibagikan, dan berbagai usaha dilakukan untuk menyembunyikan pembagian selanjutnya.⁷ Namun keseluruhan bukti yang substansial menunjukkan bahwa senjata-senjata terus disediakan kepada milisi setelah April.

Mungkin bukti yang paling nyata adalah fakta bahwa anggota-anggota milisi di seluruh Timor-Leste terlihat membawa dan mempergunakan senjata modern standar TNI dan Polri, termasuk M-16, SKS, S-1, dan granat tangan, sementara sebagian besar memiliki senapan Mauser dan G-3 dari zaman penjajahan Portugis. Bahkan jika seseorang menerima pernyataan yang tidak masuk akal bahwa senjata-senjata ini tidak dibagikan oleh TNI atau Polri, faktanya tetap bahwa pihak yang berwenang tidak mengambil tindakan apapun untuk menyita senjata, atau memproses hukum orang-orang yang memiliki senjata tersebut. Penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa pihak yang berwenang ingin memastikan bahwa milisi bisa mendapatkan senjataapi.

Kesimpulan yang sama dapat ditarik dari tindakan para perwira dan pemimpin milisi ketika menghadapi persoalan perlucutan senjata, yang telah lama menjadi pembahasan hangat dan mencapai puncaknya di pertengahan Agustus 1999. Seperti yang dikemukakan dalam Bab I, di awal Agustus 1999 Falintil mulai menarik mundur satuan-satuan bersenjata ke dalam empat wilayah ‘kantonisasi’ di berbagai tempat di Timor-Leste. Mereka tetap berada di sana, walaupun ancaman kekerasan oleh milisi dan TNI semakin meningkat seiring dengan mendekatnya hari pemungutan suara. Para pejabat UNAMET mengungkapkan penghargaan pada komitmen Falintil untuk menghindari konflik bersenjata melalui kantonisasi, dan menyerukan kepada milisi dan TNI untuk melakukan hal yang sama.

Para pemimpin TNI dan milisi secara tegas menolak melakukan hal yang sama, namun di hadapan meningkatnya tekanan internasional, di pertengahan Agustus mereka menyelenggarakan empat ‘upacara kantonisasi’ di mana para anggota milisi menyerahkan berbagai macam senjata kepada para pejabat militer dan kepolisian setempat. Sebagian besar pengamat asing, termasuk Perwira Penghubung Militer UNAMET mengungkapkan keraguan yang mendalam dan berpikir bahwa senjata-senjata yang dalam upacara di depan umum diserahkan itu hanyalah sebagian

.....
* Penyangkalan itu bahkan menjadi lebih kuat setelah terjadinya kekerasan yang mengerikan pada September 1999. Bersaksi di hadapan sidang Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta, Kolonel Tono Suratman secara tegas menolak bahwa militer telah memasok senjata kepada milisi. “Kami tidak pernah memberi mereka senjata,” katanya. Lihat “Tono Bantah Keterlibatan TNI dan Polri,” *Media Indonesia*, 23 Oktober 2002.

sangat kecil dari senjata yang berada di tangan milisi. Mereka juga mencatat bahwa, mengingat fakta bahwa orang-orang milisi kenyataannya tidak berada di kantonisasi, tidak ada jaminan bahwa senjata-senjata yang sudah dikembalikan itu tidak akan dibagikan kembali kepada milisi segera setelah upacara itu selesai.

Menurut kesaksian banyak orang, itulah yang sebenarnya terjadi. Ketika hari pemungutan suara mendekat, pembagian senjata kepada milisi sangat meningkat, dan dengan kepergian sebagian besar pengamat internasional setelah 4 September, para perwira TNI sekali lagi mendapatkan kebebasan untuk membagikan senjata kepada milisi tanpa malu-malu lagi. Kesaksian seorang saksimata yang dapat dipercaya menyatakan bahwa sejumlah besar—mungkin ratusan—senjataapi dibagikan oleh TNI dan Polri setelah pemungutan suara. Pola ini menunjukkan tidak hanya hubungan yang erat antara milisi dan TNI, tetapi juga suatu tingkat perencanaan dan koordinasi TNI, sekurang-kurangnya di tingkat Korem dan mungkin tingkat yang lebih tinggi. Kesimpulan tersebut juga sesuai dengan bukti bahwa perwira-perwira tinggi TNI terlibat dalam penyediaan senjata di dalam masa sebelum pemungutan suara.

Namun akan menjadi salah arah kalau menyatakan bahwa milisi sepenuhnya dilengkapi dengan senjataapi modern yang canggih. Sementara sebagian memang mendapatkan senjataapi modern, kebanyakan milisi dipersenjatai dengan apa yang disebut 'senjata rakitan' serta parang, pedang, pisau, dan tombak. Dibuat dari dua atau lebih pipa baja yang dilekatkan pada sebatang penampang kayu, sepucuk senjata rakitan ditembakkan dengan menyulutkan korek api mancis atau gas pada bagian atas senjata tersebut, di dasar pipa baja. Ledakan yang dihasilkan mengirim sebuah bola besi atau pecahan logam yang meluncur keluar dari pipa yang sedikit banyak mengarah pada sasaran. Bagi mata yang tidak terlatih, senjata rakitan itu menyerupai senjataapi abad ke-17 dan ke-18, dan banyak kesaksian menyebutkan bahwa senjata itu tidak andal.

Sekilas, ketergantungan milisi pada senjata-senjata yang berteknologi rendah semacam itu tampak tidak sesuai dengan klaim bahwa mereka didukung secara resmi oleh TNI, atau bahwa kekerasan adalah sesuatu yang direncanakan dengan seksama. Jika mereka sungguh-sungguh dalam menggunakan milisi untuk mengintimidasi oposisi dan menciptakan kekacauan, tentunya TNI akan memberikan kepada mereka akses untuk mendapatkan senjata yang canggih dan membiarkan mereka lepas. Akan tetapi, setelah dianalisis lebih dalam, jelas bahwa penggunaan teknologi senjata sederhana itu sepenuhnya konsisten dengan bukti tentang pembagian senjata dan koordinasi kekerasan milisi oleh TNI.

Dari sudut pandang ahli strategi TNI, senjata rakitan, parang, pisau, tombak, pedang, dan batu setidaknya memiliki tiga keuntungan. Pertama, senjata-senjata itu membuat lebih mudah untuk mempertahankan ilusi bahwa milisi tumbuh secara spontan dari masyarakat. Kedua, jauh lebih kecil bahaya bahwa senjata-senjata sederhana semacam itu akan dapat dibalikkan untuk melawan TNI atau Polri apabila terjadi pemberontakan, atau bila terjadi kehilangan senjata atau penjualan senjata

ke pihak musuh.^{*} Akhirnya, di luar kesederhanaannya, senjata-senjata ini amat efektif untuk menyebarkan teror. Walaupun senjata rakitan sama kemungkinannya untuk melukai pemiliknya maupun sasaran yang dikehendaki, namun senjata itu dapat menghasilkan luka yang serius, dan menimbulkan dampak yang mengerikan. Begitu pula dengan parang, pisau, tombak, pedang, dan batu.

Senjata: Bukti dokumenter

Di samping bukti kesaksian semacam itu, sejumlah dokumen rahasia yang terungkap sejak 1999 mengonfirmasikan pertanggungjawaban langsung TNI dalam membagikan senjata kepada, dan menoleransi kepemilikannya oleh, kelompok-kelompok milisi. Lebih jauh, dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa para perwira TNI mengendalikan dengan hati-hati arus senjata, mengeluarkan, dan menariknya kembali sesuai dengan tujuan politik dan militer mereka.

Satu bukti penting adalah dokumen dari Komando Distrik Militer Baucau (Kodim 1628/Baucau) bertanggal 3 Februari 1999. Dokumen itu mendaftar 91 anggota Kompi Khusus Pusaka, yang dikenal sebagai milisi Saka. Berjudul “Daftar: Nominatif Anggota Kompi Khusus Pusaka, Kodim 1628/Baucau,” dokumen itu mencatat jenis dan nomor registrasi senjata yang dibagikan kepada semua, kecuali satu orang, anggota kelompok tersebut. Senjata yang terdaftar mencakup: 1 PMI/Pindad, 19 G-3, 56 SP-II, 10 SP-I, 1 FNC, 1 M16A1, 1 AK, dan 1 Mauser. Dokumen itu ditandatangani oleh seorang pemimpin milisi yang terkenal, Joanico C. Belo, yang disebutkan sebagai Sersan Satu dan Komandan Kompi Khusus Pusaka.[†]

Dokumen kedua yang relevan dengan persoalan pembagian senjata TNI adalah satu daftar yang dibuat oleh Kodim Viqueque, yang berisi lebih daripada 49 anggota milisi Makikit. Berjudul “Daftar: Nominatif Pemegang Senjata Team Makikit,” dokumen ini memerinci jenis dan nomor registrasi senjata yang dibagikan kepada setiap anggota. Senjata yang terdaftar di dalamnya meliputi tiga pucuk M16A-1, 35 pucuk SP-1, dan 11 pucuk Garand. Dokumen ini tak bertanggal, tetapi satu catatan pinggir menunjukkan bahwa dokumen itu ditemukan di Kodim 1630/Viqueque pada 28 Oktober 1998.[‡]

Bukti dokumenter ketiga yang berhubungan dengan persoalan senjata adalah satu lembar telegram rahasia, bertanggal 2 Februari 1999, dari Danrem kepada semua Dandim dan Komandan Satgas Tribuana, yang dikeluarkan untuk mengantisipasi

^{*} Perwira Penghubung Militer UNAMET di Viqueque menyatakan kekhawatiran ini dalam hubungannya dengan kelompok milisi 59/75 Junior, dalam satu laporan Agustus 1999: “Kami tidak percaya bahwa TNI atau KOPASSUS mempercayai anggota 59/75 Junior untuk diberi senjata dan amunisi.” UNAMET, MLO-Viqueque, Sitrep, 5 Agustus 5, 1999, halaman 3. Laporan ini dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

[†] Kodim 1628/Baucau, “Daftar: Nominatif Anggota Kompi Khusus Pusaka, Kodim 1628/Baucau,” 3 Februari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #9).

[‡] Kodim 1630/Viqueque, “Daftar: Nominatif Pemegang Senjata Team Makikit,” tak bertanggal tetapi ditemukan di Kodim 1630/Viqueque tanggal 28 November 1998 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #4).

kunjungan delegasi PBB ke Timor-Leste di bulan tersebut.^{*} Dokumen itu menunjukkan dengan jelas bahwa TNI telah menarik untuk sementara waktu senjata dari milisi dan kemudian mengembalikannya lagi kepada milisi. Telegram itu memerintahkan kepada semua Dandim dan Komandan Satgas Tribuana V untuk mempersiapkan laporan tentang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak prokemerdekaan terhadap kelompok-kelompok milisi, dan menginstruksikan mereka untuk memfokuskan pada “periode penarikan senjata terhadap Surwan/Ratih sampai dengan pemegang/inventaris senjata terhadap Surwan/Ratih.” Fakta bahwa perintah ini juga disampaikan kepada Komandan Satgas Tribuana menunjukkan bahwa Kopassus secara integral—walaupun tidak eksklusif—terlibat dalam pembagian dan pengendalian senjata.[†]

Peran Kopassus dalam pembagian senjata dan pelatihan telah dikonfirmasi dalam sidang-sidang pengadilan yang dilaksanakan sejak 1999. Pada April 2000, seorang pemimpin kelompok milisi Sakunar di Oecussi, Laurentino Moko, bersaksi di hadapan pengadilan Indonesia bahwa ia telah diberi sejumlah senapan pada 1999 oleh dua orang perwira Kopassus.[‡] (Lihat ringkasan kabupaten: Oecussi.) Sama halnya, dalam pengadilan terhadap beberapa anggota milisi Tim Alfa yang didakwa membunuh lima orang agamawan dan empat orang lainnya pada 25 September 1999, pemimpin milisi tersebut, Joni Marques, bersaksi bahwa dirinya telah dilatih oleh Kopassus sejak 1986, dan telah menerima sejumlah senjata dari perwira-perwira Kopassus setelah pemungutan suara 30 Agustus.[§] Dalam penilaiannya mengenai kasus ini, Pengadilan Distrik Dili menyimpulkan bahwa: “Pasukan Khusus Kopassus memberikan senjata dan pelatihan kepada anggota-anggota Tim Alfa”[¶] (Lihat Studi Kasus: Pembunuhan Rohaniwan Los Palos.)

Penting untuk dicatat bahwa, selain menunjukkan keterlibatan langsung TNI dan Kopassus di dalam mempersenjatai milisi, bukti ini juga mengonfirmasikan bahwa milisi tidak diberi akses yang tidak terbatas pada senjataapi modern. Sebaliknya, senjata-senjata disimpan—biasanya di sebuah pos komando militer—dan dibagikan kepada milisi sebelum operasi militer tertentu dilancarkan. Sesudah operasi dilaksanakan, senjata-senjata dikembalikan kepada militer. Berbicara kepada para jaksa penyidik Indonesia di akhir 1999, Jenderal Wiranto memperjelas persoalan ini: “Kadang-kadang senjata diberikan,” katanya, “tetapi tidak berarti [para milisi] membawa senjata ke mana saja mereka pergi. Senjata-senjata disimpan di markas Komando Rayon Militer.”^{**}

* Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639, Dansatgas Tribuana V, dan lain-lain. Telegram rahasia No. TR/46/1999, 2 Februari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #8). Menurut isi telegram ini akan ada kunjungan oleh “Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB” pada tanggal 29 Februari 1999.

† Ibid.

‡ Karen Polglaze, “Timor militia leader back in court,” AAP, 10 April 2000.

§ Dili District Court, “Judgement,” Joni Marques et al., halaman 58.

¶ Dili District Court, “Judgement,” Joni Marques et al., halaman 53.

** Dikutip dalam Kevin O’Rourke, *Reformasi: The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia*, Sydney: Allen & Unwin, 2002, halaman 352.

Pola kontrol TNI atas akses milisi kepada senjata, yang sering disebut dalam kesaksian saksi, juga dikonfirmasi oleh dokumen militer yang lain. Salah satu dokumen semacam itu adalah satu telegram rahasia bertanggal 28 Januari 1999 dari Danrem Kolonel Tono Suratman, kepada ke-13 orang Dandim di Timor-Leste. Telegram itu memerintahkan para Dandim untuk:

“Melaksanakan penarikan senjata yang dipegang oleh anggota-anggota Wanra atau Ratih selama tidak melaksanakan tugas khusus atau operasi tempur di wilayah Kodim masing-masing.”

Perintah ini tidak hanya menunjukkan bahwa para perwira TNI melakukan pengendalian yang signifikan atas akses milisi pada senjata, tetapi juga menambahkan bobot pada bukti bahwa para pejabat militer secara langsung terlibat dalam perencanaan dan koordinasi operasi-operasi milisi, termasuk operasi yang mengakibatkan pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pembunuhan.

Tentang hal terakhir ini, telegram bertanggal 28 Januari memberikan bukti penting. Bukti ini menyebut secara eksplisit beberapa kasus di mana para anggota milisi mempergunakan senjata yang diberikan kepada mereka oleh TNI untuk membunuh atau melukai dengan serius penduduk sipil. Kasus-kasus yang dicatat dalam perintah tersebut mencakup: pembunuhan Julião Gonçalves Sarmento oleh anggota milisi Saka Norberto Lopes, di Desa Defauasi, Kecamatan Baguia, Kabupaten Baucau, pada 3 Desember 1998; pembunuhan dua orang pemuda prokemerdekaan dan penyerangan yang melukai lima orang lainnya yang dilakukan oleh anggota-anggota milisi Mahidi di desa Manutasi, Kabupaten Ainaro, pada 3 Januari 1999; dan pembunuhan Fernando Cardoso oleh anggota Ratih bernama Alfredo, di Desa Raiman, Kecamatan Zumalai, Kabupaten Covalima, pada 23 Januari 1999.

Selanjutnya, seawal 28 Januari 1999, komandan militer Timor-Leste Kolonel Tono Suratman menyadari bahwa kelompok-kelompok milisi telah melakukan tindakan kekerasan serius dengan senjata yang diberikan oleh TNI. Pengetahuan tersebut dimiliki oleh semua Dandim dan sejumlah komandan TNI di jajaran lebih tinggi, kepada siapa telegram itu dikirimkan, yang mencakup: Panglima Komando Daerah Militer IX; Asisten Intelijen, Asisten Operasi, dan Asisten Teritorialnya; Komandan Sektor A dan Komandan Sektor B di Timor-Leste; dan Komandan Satuan Tugas Tribuana Kopassus.[†] Lebih jauh, mengingat bahwa perintah Kolonel Tono Suratman dikeluarkan beberapa saat sebelum kunjungan delegasi PBB yang akan dilakukan pada Februari 1999, hal tersebut juga cocok dengan pola, yang dibahas dalam Bab 4, bahwa perwira TNI dengan seksama mengendalikan kekerasan milisi sesuai dengan tujuan politik yang lebih luas.

* Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan lain-lain. Telegram rahasia No. TR/41/1999, 28 Januari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #7).

† Lihat: Danrem 164/WD kepada Dandim 1627-1639 dan lain-lain. Telegram rahasia No. TR/41/1999, 28 Januari 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #7).

Secara bersama, bukti-bukti yang ditampilkan di dalam bab ini menunjuk secara konklusif pada peran TNI yang kuat dalam melakukan perekrutan, pelatihan, dan operasi pasukan-pasukan milisi, serta pada keterlibatan langsung TNI dalam pelanggaran berat yang dilakukan oleh milisi. Secara lebih spesifik, bukti-bukti ini memungkinkan ditariknya kesimpulan-kesimpulan berikut ini.

Pertama, para prajurit dan perwira TNI secara integral terlibat di dalam perekrutan milisi di akhir 1998 dan awal 1999, dan sebagian dari mereka benar-benar bertugas sebagai anggota dan pemimpin milisi. Keanggotaan rangkap di TNI dan milisi yang telah didokumentasikan membuat tidak berartinya pembedaan formal antara keduanya, dan secara langsung melibatkan TNI di dalam tindakan-tindakan yang seolah-olah dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi secara mandiri.

Kedua, tidak ada keraguan sedikitpun bahwa kelompok-kelompok milisi menerima pelatihan dan pengarahan dari perwira-perwira TNI. Pelatihan tersebut bukanlah pelatihan yang pura-pura, atau yang dilakukan oleh sejumlah kecil 'oknum.' Sebaliknya, bukti menunjukkan secara konklusif bahwa pelatihan milisi merupakan tugas rutin, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sudah tetap yang berasal dari markas besar TNI di Jakarta. Lebih jauh, pelatihan itu dilakukan dengan sepengetahuan penuh para pejabat tinggi TNI, termasuk minimal: Panglima Komando Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri; Danrem Kolonel Tono Suratman, Komandan Satuan Tugas Tribuana Kopassus; Komandan Sektor A dan Komandan Sektor B; dan kemungkinan semua Dandim dan Danramil di Timor-Leste.

Ketiga, TNI secara rutin menjalankan operasi bersama dengan kelompok-kelompok milisi, dan memberikan dukungan dan bantuan untuk operasi-operasi yang seolah-olah dilakukan oleh milisi. Perwira-perwira tingkat tinggi TNI, termasuk Kolonel Tono Suratman dan lain-lain, mengetahui dengan baik bahwa semua operasi itu mengakibatkan tindakan kekerasan yang serius. Mereka juga memahami bahwa kerjasama operasional semacam itu melanggar Kesepakatan 5 Mei. Karena alasan itu, begitu UNAMET mulai bertugas pada Juni 1999, TNI berusaha menyamarkan hubungan operasionalnya dengan milisi, tetapi gagal.

Keempat, TNI memberikan senjata modern yang canggih secara langsung kepada sejumlah anggota milisi, dan membiarkan yang lain untuk menyimpan dan menggunakan senjata mereka sendiri, yang bertentangan dengan hukum. Para perwira tinggi, termasuk Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Adam Damiri, Kolonel Tono Suratman, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat mengetahui bahwa senjata-senjata ini dipergunakan untuk melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, tetapi gagal menindak para pelakunya, atau mengakhiri akses milisi pada senjata.

Terakhir, bertentangan dengan pernyataan-pernyataan resmi bahwa milisi bertindak sendiri, dan bahwa TNI dan Polri telah melakukan yang terbaik untuk membendung kekerasan, jelas bahwa TNI memegang kontrol yang signifikan terhadap akses milisi pada senjata. Penemuan tersebut memperkuat argumen, yang dibuat dalam Bab 4, bahwa pihak yang berwenang membagikan dan menarik kembali senjata sebagai bagian dari usaha yang diatur dengan seksama untuk memengaruhi irama kekerasan, sesuai dengan tujuan politik dan militer yang lebih luas.

Milisi: Pendanaan dan dukungan material

Para pejabat pemerintah telah berusaha keras membantahnya,^{*} tetapi milisi-milisi di Timor-Leste menerima dukungan finansial dan material yang besar dari pihak berwenang pemerintah dan militer Indonesia. Sebenarnya, pemberian pemerintah merupakan landasan esensial bagi seluruh operasi milisi. Anggota biasa milisi menerima Rp200.000,00 (USD26,6) pada saat bergabung, dan antara Rp50.000,00 (USD6,66) dan Rp150.000,00 (USD20) per bulan sesudahnya. Selain pembayaran tunai dan akses pada senjata, mereka menerima pembagian beras secara teratur, kendaraan, makanan ketika melaksanakan operasi, transportasi, bahan bakar, ruang kantor, peralatan komunikasi, poster, pakaian, dan obat-obatan. Penyediaan dana dan dukungan material semacam itu melibatkan pejabat-pejabat sipil dan militer dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh para milisi, yang merupakan target penyaluran dukungan tersebut.

'Sosialisasi' dan pendanaan milisi

Pendanaan resmi yang paling banyak kita ketahui mengalir dari aparat pemerintah sipil, terutama di bawah naungan kampanye 'sosialisasi' pro-otonomi. Para pejabat tinggi pemerintah mengakui bahwa dana pemerintah dipergunakan untuk kampanye tersebut. Misalnya, Menteri Luar Negeri Ali Alatas, mengatakan: "Tentu saja ada uang yang digunakan untuk penyebaran informasi ... Kami setuju dengan PBB bahwa ada suatu masa sosialisasi."[†]

Jumlah keseluruhan dana untuk 'sosialisasi' belum diketahui, tetapi dokumen-dokumen pemerintah Indonesia yang terungkap sampai saat ini menunjukkan bahwa sekitar Rp3 miliar (USD400.000) disalurkan ke setiap kabupaten dari seluruhnya 13 kabupaten untuk mendukung kampanye pada 1999, sehingga keseluruhan dana sedikitnya berjumlah Rp39 miliar (USD5,2 juta).[‡] Walaupun jumlahnya berbeda-beda dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya, di semua kasus sebagian dari dana tersebut digunakan untuk membayar milisi.

Bukti dan perincian pendanaan resmi untuk kampanye 'sosialisasi', dan melaluinya untuk kegiatan milisi, ditemukan dalam beberapa dokumen yang terungkap pada 1999 dan sesudahnya. Dokumen-dokumen yang relevan mencakup: (i) sepecuk surat pada Mei 1999 dari Gubernur Timor Timur kepada semua bupati, yang menginstruksikan

^{*} Lihat, misalnya, Ali Alatas dalam SBS, *Dateline*, "Timor Terror Fund," 16 Februari 2000, transkrip, halaman 17.

[†] Dikutip dalam SBS, *Dateline*, "Timor Terror Fund," 16 Februari 2000, transkrip, halaman 23.

[‡] Surat dakwaan terhadap Wiranto dan tujuh pejabat tinggi Indonesia lainnya, dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum Timor-Leste untuk Kejahatan Berat, menyebutkan bahwa jumlah seluruh dana yang dikeluarkan untuk kampanye 'sosialisasi' adalah Rp53 miliar atau 60 persen dari Anggaran Pembangunan Daerah Timor Timur. Lihat Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, paragraf 28.

mereka menyusun proposal anggaran penggunaan dana pemerintah untuk kegiatan 'sosialisasi'; (ii) proposal anggaran untuk kegiatan 'sosialisasi' yang diajukan kepada gubernur oleh Bupati Manufahi dan Bupati Bobonaro pada Mei 1999; dan (iii) surat dari gubernur kepada Bupati Lautém dan Bupati Oecussi berturut-turut pada Mei dan Juni, yang menyetujui proposal anggaran tersebut.^{*}

Dokumen-dokumen ini dengan jelas menunjukkan bahwa semua kabupaten diinstruksikan mengajukan permintaan dana untuk membiayai kegiatan 'sosialisasi,' bahwa mereka melakukannya, dan bahwa permintaan tersebut disetujui oleh gubernur. Dokumen-dokumen ini juga menunjukkan, tanpa keraguan, bahwa sebagian dari uang yang dialokasikan untuk 'sosialisasi' dalam anggaran-anggaran semacam itu secara eksplisit dikhususkan untuk milisi dan bermacam-macam kegiatan yang mungkin memberikan penyamaran untuk kegiatan-kegiatan milisi.

Bukti yang paling jelas untuk mendukung kesimpulan ini adalah surat dari Gubernur Timor Timur kepada semua bupati pada Mei 1999. Di dalamnya, gubernur menginstruksikan setiap bupati untuk menyusun proposal anggaran, sesuai dengan suatu kerangka yang mencakup pengeluaran untuk 'sosialisasi' dan 'Pam Swakarsa' (yaitu milisi).[†] Kemudian dalam bulan tersebut, para bupati menyerahkan proposal mereka.

Proposal anggaran Bupati Manufahi dan Bupati Bobonaro yang diajukan kepada Gubernur masing-masing meminta sekitar Rp3 miliar dana pemerintah untuk kegiatan 'sosialisasi' yang dilaksanakan di daerah mereka masing-masing.[‡] Surat-surat dari gubernur kepada Bupati Lautém dan Bupati Oecussi memberikan persetujuan resmi untuk proposal anggaran yang meminta sekitar Rp3 miliar untuk kampanye sosialisasi di kabupaten masing-masing, dengan hanya membuat perubahan kecil anggaran di kedua kabupaten tersebut. "Dengan ini kami beritahukan," tulis gubernur kepada kedua bupati tersebut, "bahwa pada prinsipnya proposal anggaran dan dana yang seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000 disetujui."[§]

* Lihat: Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Oecussi, Juni 1999; Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 1999; Proposal untuk sosialisasi otonomi khusus di Manufahi, Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2); dan Bupati Bobonaro, "Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi Timor Timur," 24 Mei 1999 (Koleksi HRU, Doc BOB #2).

† Salinan surat gubernur kepada Bupati Liqúicá bertanggal 21 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK). Salinan surat yang lain, ditujukan kepada semua bupati, ditandatangani namun tak bertanggal. Lihat: Gubernur Timor Timur, surat kepada semua bupati mengenai "Proposal," Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #A).

‡ Jumlah tepatnya yang diminta adalah Rp3,162 miliar untuk Bobonaro dan Rp 3,0 miliar untuk Manufahi. Lihat: Bupati Bobonaro, "Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi Timor Timur," 24 Maret 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #2), dan Bupati Manufahi, "Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus di Manufahi," Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2).

§ Lihat: Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Oecussi, Juni 1999; Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2). [Keterangan penerjemah: Penerjemah tidak berhasil mengecek ulang bahasa Indonesia dari dokumen-dokumen yang termasuk dalam Koleksi SCU, Doc #2. Dengan demikian kutipan kata-kata dalam surat Gubernur Timor Timur tersebut dan kutipan-kutipan lain dari Koleksi SCU, Doc #2 adalah terjemahan bahasa Indonesia atas terjemahan bahasa Inggris dari dokumen aslinya.]

Proposal anggaran dan surat persetujuan gubernur mengungkapkan dengan jelas bagaimana dana pemerintah digunakan. Sebanyak 20 persen dari seluruh anggaran dialokasikan untuk pembayaran kepada para pejabat pemerintah dan militer di tingkat kabupaten, yang secara bersama disebut Kodal (Komando Daerah Lapangan).^{*} Menurut proposal anggaran Kabupaten Manufahi, pembayaran Kodal akan mencakup: Rp100 juta (USD13.333) untuk bupati, Rp50 juta (USD6.666) untuk Dandim, Rp50 juta (USD6.666) untuk Kapolres, Rp30 juta (USD4.000) untuk Komandan Sektor TNI, Rp25 juta (USD3.333) untuk Komandan Batalion Teritorial, Rp25 juta (USD3.333) untuk Komandan Satgas Tribuana Kopassus, Rp20 juta (USD2.666) masing-masing untuk empat camat di Kabupaten Manufahi, dan Rp10 juta (USD1.333) masing-masing untuk 29 kepala desa.[†]

Menurut proposal Manufahi, pengeluaran ‘Kodal’ ini ditujukan untuk membayar “... biaya-biaya yang berkaitan dengan substansi rencana otonomi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi.” Rumusan yang kabur tersebut memastikan bahwa alokasi Kodal akan dapat dengan mudah digunakan, di antara tujuan-tujuan yang lain, untuk membiayai dan memasok kelompok-kelompok milisi. Walaupun ini sulit dikonfirmasi, seorang bekas pejabat di pemerintah Kabupaten Bobonaro (Benjamin Barreto) telah menyatakan bahwa Dandim di sana menerima sekitar Rp800 juta (USD106.666) dan bahwa Dandim itu menggunakannya untuk membiayai pembunuhan terhadap orang-orang prokemerdekaan: “Untuk setiap orang yang dibunuh akan diberi imbalan Rp3 juta (USD400). Itulah rencana Komandan Distrik Militer.”[‡]

Bagian besar dari anggaran yang disetujui oleh gubernur juga dicadangkan untuk kategori-kategori yang tidak jelas seperti ‘sosialisasi’ (20%), ‘bantuan masyarakat’ (30%), ‘penggalangan’ (15%), dan ‘pembentukan infrastruktur’ (5%).[§] Kategori-kategori yang luas ini memberikan keleluasaan yang cukup bagi dana-dana ini untuk dapat dialihkan oleh para pejabat dan dipergunakan sesuai dengan kehendak mereka. Menurut proposal Manufahi, misalnya, Rp356 juta (USD47.466) yang terdapat dalam dana ‘Satuan Tugas Sosialisasi’ “ditujukan untuk mendukung kegiatan 150 anggota Satuan Tugas Sosialisasi, termasuk penyediaan pakaian, makanan, latihan, dan uang saku.” Proposal Bobonaro juga menyebutkan ‘Satuan Tugas Sosialisasi’ yang mendapatkan alokasi sebesar Rp150 juta (USD20.000).[¶] Komposisi yang

* Jumlah 20 persen untuk Kodal ditetapkan dalam anggaran yang sudah direvisi yang digariskan dalam surat Gubernur kepada Bupati Oecussi dan Bupati Lautem (Koleksi SCU, Doc #2).

† Bupati Manufahi, “Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus di Manufahi,” Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2). Proposal Bobonaro mengalokasikan Rp510 juta untuk pembiayaan Kodal dengan perincian yang hampir sama. Lihat: Bupati Bobonaro, “Proposal Kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi Timor Timur,” 24 Mei 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #2).

‡ Dikutip dalam SBS, *Dateline*, “Timor Terror Fund,” 16 Februari 2000, transkrip, halaman 31.

§ Kategori-kategori dan prosentase yang dikutip di sini berasal dari anggaran yang sudah direvisi yang dimuat dalam surat persetujuan Gubernur kepada Bupati Lautem dan Bupati Oecussi (Koleksi SCU, Doc #2).

¶ Lihat: Bupati Bobonaro, “Proposal Kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi Timor Timur,” 24 Mei 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #2).

tepat untuk 'Satuan Tugas Sosialisasi' tidak dirinci dalam kedua proposal tersebut. Akan tetapi, dari penilaian terhadap pelaksanaan nyata kampanye 'sosialisasi' di Manufahi dan Bobonaro dan di tempat-tempat lain, perincian itu memasukkan para pemimpin dan anggota milisi. Dalam cara yang sama, sebagian dari alokasi untuk 'bantuan masyarakat,' 'penggalangan,' dan 'pembentukan infrastruktur' hampir pasti disalurkan kepada milisi.

Di samping pemberian dana yang tidak langsung semacam itu, semua proposal anggaran sosialisasi dan persetujuan gubernur itu secara eksplisit mengalokasikan dana untuk organisasi-organisasi milisi dan paramiliter. Dalam surat instruksi kepada semua bupati di bulan Mei, dan surat persetujuannya kepada Bupati Lautém dan Bupati Oecussi, misalnya, gubernur mengkhhususkan 5 persen dari seluruh anggaran di setiap kabupaten untuk Pam Swakarsa, istilah resmi untuk kelompok-kelompok milisi.^{*}

Dana-dana tambahan diberikan kepada kelompok-kelompok milisi di bawah bermacam-macam kategori lain. Di bawah judul 'bantuan untuk organisasi,' misalnya, Kabupaten Manufahi mengusulkan penyaluran dana kepada berbagai kelompok pro-otonomi dan milisi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh proposal tersebut:

"Peran organisasi-organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai otonomi. Dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi-organisasi setempat, seperti BRTT, FPKD, Klibur dan ABLAI, organisasi-organisasi tersebut akan diberi bantuan dana."[†]

Tiga yang pertama dari kelompok-kelompok tersebut masing-masing menerima Rp25 juta (USD3.333), sementara ABLAI, kelompok utama milisi bersenjata di kabupaten ini, mendapatkan jatah sebesar Rp50 juta (USD6.666). Dana-dana ini di luar 5 persen dari seluruh anggaran Kabupaten Manufahi yang dialokasikan untuk Pam Swakarsa.[‡]

Proposal Kabupaten Bobonaro juga meminta dana untuk organisasi-organisasi pro-otonomi dan milisi. Di bawah kategori 'pembentukan infrastruktur,' proposal itu mengalokasikan Rp90 juta (USD12.000) untuk FPKD, BRTT, dan kelompok milisi paramiliter Halilantar. Dalam satu kategori yang terpisah, anggaran ini mengalokasikan Rp1 miliar, atau sekitar sepertiga dari seluruh anggaran sosialisasi, kepada Pam Swakarsa (yaitu milisi). Jumlah tersebut, seperti yang dijelaskan oleh proposal, meliputi biaya 'uang saku,' 'uang makan,' dan 'perlengkapan komunikasi' untuk kelompok-kelompok milisi.[§]

^{*} Lihat: Surat Gubernur Timor Timur kepada Bupati Oecussi, Juni 1999; Surat Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2).

[†] Bupati Manufahi, "Proposal Sosialisasi Otonomi Khusus di Manufahi," Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2).

[‡] Ibid.

[§] Bupati Bobonaro, "Proposal Kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Luas Propinsi Timor Timur," 24 Mei 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #2).

Di samping bukti bahwa pemerintah di tingkat kabupaten meminta pendanaan bagi milisi, dan bahwa dana ini disetujui oleh gubernur, ada bukti bahwa dana dan pasokan lainnya benar-benar dibagikan kepada milisi. Dokumen-dokumen dari kelompok milisi Aitarak, misalnya, memberikan perincian pembayaran kepada para anggota milisi ini di Kabupaten Dili. Satu dokumen dari Juni 1999, yang ditandatangani oleh Komandan Aitarak Eurico Guterres, menunjukkan bahwa anggota milisi biasa masing-masing menerima 10 kg beras dan uang Rp150.000,00 (USD20) per bulan; sementara anggota yang bekerja sebagai pegawai negeri menerima 10 kg beras dan uang Rp50.000,00 (USD6,66) selain gaji normal mereka. Dokumen itu berisi daftar 1.355 orang anggota biasa, 107 orang anggota yang pegawai negeri, dan 60 orang ‘penasihat’ serta menunjukkan bahwa jumlah total yang dibayarkan untuk Juni 1999 adalah 15.220 kg beras dan uang Rp22.760.000,00 (USD3.034,66) untuk gaji.*

Sumber pendanaan pemerintah

Dokumen-dokumen pemerintah dan kesaksian dari para mantan pegawai negeri sipil memberikan informasi penting tentang sumber-sumber pendanaan pemerintah untuk milisi dan kelompok-kelompok pro-otonomi. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa dana-dana dialihkan, dengan persetujuan resmi, dari anggaran berbagai departemen pemerintah (termasuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pekerjaan Umum dan Transmigrasi) ke anggaran ‘sosialisasi’, yang merupakan anggaran untuk membayar milisi-milisi tersebut. Dokumen-dokumen itu juga mengonfirmasikan dugaan bahwa sebagian dari anggaran ‘sosialisasi’ secara langsung datang dari Jakarta di bawah naungan satu rencana pembangunan yang didanai melalui Kantor Kepresidenan.

Sebagian bukti kunci datang dari Kabupaten Bobonaro, dan meliputi: (i) satu dokumen dari Dinas Anggaran Kabupaten Bobonaro, mengenai Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;[†] (ii) satu buku kas dari Dinas Anggaran Kabupaten Bobonaro bertanggal 5 Juli 1999;[‡] dan (iii) sepucuk surat dari Bupati Bobonaro kepada gubernur yang meminta izin untuk mengalihkan dana dari mata anggaran lain untuk digunakan kampanye ‘sosialisasi’.[§] Secara bersama-sama, dokumen-dokumen ini mengonfirmasikan bahwa dana untuk milisi, dan untuk kampanye ‘sosialisasi’ secara lebih umum, dialihkan dari anggaran normal pemerintah, dan bahwa sebagian jika bukan seluruh dana itu didatangkan secara langsung dari Jakarta.

* Mirip dengannya, satu dokumen internal Aitarak menunjukkan bahwa kelompok milisi ini memiliki anggaran gaji Rp356.340.000 (USD47.512) yang darinya Rp221.104.000 (USD29.480) dikeluarkan pada 23 Agustus 1999. Lihat: Komando Pasukan Aitarak, memorandum dari Bendahara kepada Eurico Guterres, 24 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #79).

† Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, “DIPDA [Daftar Isian Proyek Daerah] Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1999/2000” (Koleksi HRU, Doc. BOB#3).

‡ Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, “Laporan: Keadaan Kas Bendahara Per 30 Juni 1999,” Maliana, 5 Juli 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #4).

§ Bupati Bobonaro kepada Gubernur Timor Timur. Surat Rahasia No. 195/UM/VII/1999, 27 Juli 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #5).

Yang pertama dari dokumen-dokumen ini, yang menyebut ‘Proyek Pembangunan Regional dan Daerah’ Bobonaro menunjukkan bahwa total anggaran untuk proyek tersebut adalah Rp3,162 miliar—tepat sama dengan jumlah anggaran sosialisasi yang diajukan oleh bupati kepada gubernur di akhir Mei 1999. Kesesuaian yang tepat ini menegaskan bahwa pemberian dana untuk kampanye ‘sosialisasi’ disetujui dan didanai dengan nama ‘Proyek Pembangunan Regional dan Daerah,’ dan bahwa kampanye ‘sosialisasi’ dan program ‘pembangunan’ tersebut adalah hal yang sama.

Kesimpulan tersebut dikonfirmasi oleh dokumen kunci kedua, buku kas dari Dinas Anggaran Kabupaten Bobonaro bertanggal 5 Juli 1999 yang memberikan perincian dari anggaran ‘Proyek Pembangunan Regional dan Daerah.’ Butir-butir yang terdaftar dalam buku kas sepenuhnya sama dengan yang terdaftar dalam proposal ‘sosialisasi’ bupati. Lebih jauh, dokumen ini mengonfirmasi bahwa sekitar dua per tiga dari seluruh anggaran proyek (Rp3,162 miliar atau USD421.600) telah diterima dan disalurkan pada 30 Juni 1999, sementara sekitar sepertiganya sedang ditunggu oleh pemerintah kabupaten ini.⁶

Dokumen yang ketiga, yaitu sepucuk surat dari Bupati Bobonaro kepada gubernur, bertanggal 27 Juli 1999, memberikan informasi penting tentang sumber-sumber lain pendanaan untuk kampanye ‘sosialisasi’ di Bobonaro, dan memberikan gambaran mengenai mekanisme pemeriksaan keuangan yang mungkin telah digunakan di kabupaten-kabupaten lain. Dalam surat ini, bupati menjelaskan kepada gubernur bahwa Kabupaten Bobonaro kekurangan dana untuk membiayai kampanye ‘sosialisasi,’ dan secara khusus meminta izin untuk mengalihkan sejumlah Rp2,5 miliar (USD333.333) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum untuk kampanye ‘sosialisasi.’⁷ Bahasa permohonan Bupati itu begitu terus terang:

“Sehubungan dengan itu, dimohon persetujuan kiranya diperkenankan menggunakan dana yang telah diadakan untuk membiayai beberapa program proyek dalam DIPDA TA. 1999/2000, dialihkan penggunaannya untuk kegiatan sosialisasi Otonomi.”⁸

Satu lampiran pada surat ini memperjelas bahwa uang yang dialihkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan aslinya dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan sekolah-sekolah dasar di kabupaten tersebut.

⁶ Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, “Laporan: Keadaan Kas Bendahara Per 30 Juni 1999,” Maliana, 5 Juli 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #4).

⁷ Jumlah tepat yang diharapkan Bupati untuk dialihkan adalah: Rp850.790.000 (USD113.438) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Rp1.165.000.000 (USD155.333) dari Dinas Pekerjaan Umum. Bupati Bobonaro kepada Gubernur Timor Timur. Surat rahasia No. 195/UM/VII/1999, 27 Juli 1999 (Koleksi HRU, Doc. BOB #5).

⁸ Ibid.

Namun, Kabupaten Bobonaro samasekali tidak sendiri dalam mengalihkan dana dari pos anggaran lain ke kampanye 'sosialisasi.' Sebenarnya, bukti dokumenter memperjelas bahwa pengalihan dana untuk sosialisasi diperintahkan oleh gubernur, dengan sepengetahuan penuh pemerintah pusat. Pada Mei 1999 dalam surat yang dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) semua Departemen di Timor-Leste, dan ditembuskan kepada menteri-menteri penting di Jakarta, Gubernur secara jelas menginstruksikan bahwa antara 10 persen dan 20 persen dari semua anggaran departemen harus dialihkan untuk membiayai kampanye sosialisasi.* Bagian dalam surat yang terkait langsung dengan hal tersebut terbaca sebagai berikut:

“Dalam kaitan itu, maka semua potensi yang dimiliki di daerah sepatasnyalah kita kerahkan seoptimal mungkin untuk menyuksekannya. Kepada semua instansi vertikal diharapkan kontribusinya dengan menyisihkan dana 10 % s/d 20 % dari alokasi anggaran pembangunan ... demi sosialisasi otonomi ...”†

Ketika bersaksi di hadapan pengadilan Indonesia pada Juni 2002, Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Timor Timur Rajakarina Brahmama, mengonfirmasikan bahwa antara 10 dan 20 persen anggaran pemerintah daerah telah dialihkan untuk sosialisasi kampanye pro-otonomi, termasuk untuk milisi.‡

Juga ada bukti yang kuat bahwa sebagian besar dari sekitar Rp3 miliar yang disediakan untuk setiap pemerintah kabupaten pada 1999 diambilkan dari proyek 'Jaring Pengaman Sosial' (JPS) yang dibiayai oleh Bank Dunia. Bukti paling jelas dalam hal ini adalah surat dari Gubernur kepada semua bupati pada Mei 1999, yang sudah dikemukakan di atas, yang di dalamnya Gubernur menginstruksikan kepada para Bupati untuk menyusun proposal anggaran sosialisasi. Surat tersebut secara eksplisit menyebutkan proyek 'Jaring Pengaman Sosial' sebagai sumber dari mana dana akan diambil:

“Menyusul surat kami Nomor: 915/712/II.BIPRAM/V/1999 tanggal 5 Mei 1999 maka pelaksanaan Proyek Pembangunan Regional dan Daerah, Proyek Dukungan Pengaman Jaring Sosial (JPS) di masing-masing Daerah Tingkat II, diminta perhatian Saudara agar segera menyusun rencana penggunaan dana sesuai proposal di bawah ini.”§

Sejumlah dokumen lain juga mengindikasikan bahwa dana 'Jaring Pengaman Sosial' digunakan untuk kampanye sosialisasi. Salah satu proposal anggaran 'sosialisasi' (dari Manufahi), dan kedua surat Gubernur tentang persetujuan anggaran, secara

* Surat Gubernur tersebut ditembuskan kepada sejumlah pejabat penting termasuk: Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan (Koleksi Yayasan HAK).

† Surat dari Gubernur Timor Timur kepada semua Kepala Kantor Wilayah Departemen di Timor Timur, bertanggal Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK).

‡ “Funding for East Timor Militias Came From State,” *Jakarta Post*, 14 Juni 2002.

§ Gubernur Timor Timur kepada semua Bupati. Surat edaran perihal “Proposal,” Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #A).

tersurat menyebut 'Jaring Pengaman Sosial' sebagai proyek dari mana dana 'sosialisasi' akan diambilkan.'

Bukti kesaksian mendukung pernyataan bahwa dana 'Jaring Pengaman Sosial' dialihkan untuk membiayai kampanye 'sosialisasi.' Dalam November 1999, seorang mantan pegawai negeri sipil mengatakan kepada Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor Leste tentang adanya satu rapat di Lautém, di mana dijelaskan bahwa pendanaan untuk sosialisasi di kabupaten itu akan didapatkan dari dana yang sebenarnya dialokasikan untuk 'kegiatan kesejahteraan'—yang sangat mungkin adalah dana 'Jaring Pengaman Sosial.' Menurut perkataan Komisi Penyelidik Internasional:

“Seorang mantan pejabat pemerintah Indonesia bersaksi bahwa pada suatu rapat resmi tanggal 5 Mei 1999 dibahas persoalan penggunaan dana kegiatan kesejahteraan untuk digunakan menutupi biaya kegiatan memenangkan dukungan pada otonomi. Diputuskan untuk mengeluarkan 3,5 juta rupiah untuk pembagian beras dan berbagai barang lainnya kepada rakyat, dengan tujuan memanipulasi suara untuk memenangkan otonomi.”[†]

Secara signifikan, dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa dana-dana tersebut tidak dialihkan dengan cara sembunyi-sembunyi, tetapi dilakukan dengan jelas sesuai dengan prosedur birokratis yang sudah tetap.[‡] Dalam surat persetujuan kepada Bupati Lautém dan Bupati Oecussi, misalnya, Gubernur menjelaskan bahwa 'Tim Kontrol' proyek 'Jaring Pengaman Sosial' telah memeriksa dan menyetujui kedua proposal tersebut. Dalam suratnya kepada Bupati Lautém bertanggal 21 Mei 1999 itu, Gubernur menulis:

“Dengan hormat diberitahukan bahwa proposal Anda telah dipelajari oleh Tim Kontrol proyek Jaring Pengaman Sosial ... yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dan bahwa pada prinsipnya proposal Anda ... disetujui.”[§]

* Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Oecussi, Juni 1999; Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 1999; Proposal untuk sosialisasi otonomi khusus di Manufahi, Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #2).

† United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, "Report of the International Commission of Inquiry on the Question of East Timor," 31 Januari 2000, paragraf 63.

‡ Satu tuduhan terkait mengenai penggunaan dana 'Jaring Pengaman Sosial' sulit untuk dikonfirmasi. Satu dokumentasi Australia menyatakan bahwa 'Departemen Urusan Politik' (*sic*) [mungkin yang dimaksud adalah kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan] menyalurkan pinjaman kepada kantor Dinas Keuangan Timor Timur, dengan kesepakatan bahwa pinjaman itu akan dibayar kembali ketika dana 'Jaring Pengaman Sosial' sudah diterima. Lihat SBS, *Dateline*, "Timor Terror Fund," 16 Februari 2000, transkrip, halaman 25.

§ Surat dari Gubernur Timor Timur kepada Bupati Lautem, 21 Mei 2000 (Koleksi SCU, Doc #2).

Bukti dokumenter dan kesaksian ini mungkin tampak menunjukkan bahwa pendanaan untuk kampanye ‘sosialisasi’, dan untuk milisi, diorganisasikan secara eksklusif di tingkat kabupaten dan provinsi, dan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab adalah Gubernur dan 13 Bupati. Namun kenyataannya adalah bahwa, karena sangat sentralistisnya struktur birokrasi Indonesia, pendanaan ini tidak akan dapat dilakukan tanpa persetujuan pejabat-pejabat pemerintah pusat di Jakarta. Atas dasar itu saja, sangat beralasan untuk menyimpulkan bahwa pendanaan untuk milisi dilakukan dengan persetujuan para pejabat pemerintah pusat yang berwenang.

Juga ada bukti substansial bahwa badan-badan pemerintah pusat—termasuk beberapa departemen, badan intelijen militer BAIS (sebelum April 1999 namanya BIA), dan bahkan Kantor Kepresidenan—secara langsung terlibat dalam pengalihan dana kepada milisi, yang biasanya berselubung kedok kampanye ‘sosialisasi.’ Kesaksian dari sejumlah mantan pemimpin Timor-Leste pro-Indonesia dan pegawai pemerintah daerah Timor Timur menunjukkan bahwa pendanaan yang substansial diberikan, atau disahkan, antara lain, oleh Departemen Transmigrasi, Departemen Penerangan, dan Departemen Luar Negeri. Bukti itu menempatkan tanggung jawab yang bahkan lebih mengena pada pejabat-pejabat pemerintah pusat.

Seorang mantan tokoh Timor-Leste pro-Indonesia, Tomás Gonçalves, menyatakan bahwa di awal 1999 ia bertemu dengan beberapa pejabat tinggi TNI untuk membahas penyediaan dana dan senjata untuk kelompok-kelompok pro-otonomi. Para perwira yang ia temui disebutkan termasuk Panglima Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri; Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (dan kemudian Panglima Darurat Militer) Mayor Jenderal Kiki Syahnakri; Menteri Transmigrasi Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono; dan Menteri Penerangan Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah. “Yang mereka katakan,” kata Gonçalves, “adalah bahwa jika kami terus mempertahankan bendera merah putih, mereka siap menyediakan dana dan semua jenis senjata, dan semua pasukan di sini bisa membantu kami.”

Menurut Gonçalves, Menteri Transmigrasi Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono adalah yang paling bersemangat, dan menginstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Timor Timur untuk “menyalurkan semua anggaran departemen untuk kepentingan milisi.”[†] Menteri Penerangan Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah juga bersemangat mengenai milisi, menurut Gonçalves, dan menawarkan untuk memperkenalkan para pemimpin pro-otonomi kepada orang-orang penting di Jakarta untuk mendapatkan dukungan pemerintah: “Dalam pembicaraannya tentang persiapan milisi ia bahkan menyebut [Danrem, Kolonel] Tono Suratman pengecut, karena ia begitu lamban untuk bertindak. Kita harus bertindak sekarang karena kita siap untuk mendukung kalian dengan senjata dan apa saja.”[‡]

* Dikutip dalam SBS, *Dateline*, “Timor Terror Fund,” 16 Februari 2000, transkrip, halaman 18-19.

† SBS, *Dateline*, “Timor Terror Fund,” 16 Februari 2000, transkrip, halaman 19. Untuk pernyataan yang sama, lihat “Timor Coup Planned,” *The Age*, 22 Juni 1999.

‡ Dikutip dalam SBS, *Dateline*, “Timor Terror Fund,” 16 Februari 2000, transkrip, halaman 21.

Seorang mantan pegawai kantor dinas keuangan Timor Timur telah menyatakan bahwa dana juga disediakan oleh Departemen Luar Negeri untuk mendukung kelompok-kelompok pro-otonomi. Setidaknya Rp9 miliar (USD1,2 juta), katanya, telah diberikan kepada FPKD di awal 1999. Mengingat fakta yang diperinci berikut ini, di mana FPKD menyalurkan dana dan barang kepada kelompok-kelompok milisi, kesaksian tersebut melibatkan Departemen Luar Negeri dalam pemberian dukungan finansial kepada milisi. Kenyataannya, pengiriman dana kedua kepada FPKD dihentikan ketika Departemen Luar Negeri mengetahui bagaimana dana bagian yang pertama dipergunakan.*

Mungkin yang paling penting, ada bukti dokumenter bahwa pendanaan untuk 'sosialisasi,' dan oleh karenanya juga untuk milisi, berasal langsung dari Kantor Kepresidenan. Bukti ini terdapat dalam dua dokumen dari Bobonaro yang sudah dibahas. Yang pertama dari dokumen-dokumen tersebut, yang menyebut 'Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II' Bobonaro, memerinci bahwa sumber dana untuk proyek ini, dan dengan demikian anggaran untuk sosialisasi, adalah 'INPRES DATI II.' INPRES berarti 'Instruksi Presiden' dan DATI II berarti Daerah Tingkat II atau Kabupaten.[†]

Apa yang ditunjukkan di sini adalah bahwa uang sebesar Rp3,162 miliar (USD421.600) yang dialokasikan untuk kampanye 'sosialisasi' di Bobonaro, yang mencakup uang yang dialokasikan untuk milisi, datang langsung dari Jakarta, di bawah wewenang Kantor Kepresidenan. Sangat mungkin bahwa anggaran 'sosialisasi' di kabupaten-kabupaten yang lain datang dari sumber yang sama. Jika demikian halnya, ini berarti bahwa pertanggungjawaban untuk pendanaan milisi pada 1999 menjangkau hingga ke Kantor Kepresidenan.

Pendanaan dan dukungan material TNI

Selain sumberdaya substansial yang mengalir secara langsung dari, dan melalui, aparat pemerintah sipil, sebagian dana untuk 'sosialisasi'—dan karenanya juga untuk milisi—berasal dari, atau dibagikan melalui, saluran-saluran militer. TNI juga memberikan dukungan logistik dan material yang cukup banyak untuk milisi dalam bentuk peralatan, pakaian, transportasi, tempat tinggal, obat-obatan, dan senjata. Tingkat keterlibatan lengkap militer dalam pendanaan dan dukungan material semacam itu belum diketahui, tetapi kesaksian dari mantan anggota-anggota TNI, dan dokumen-dokumen yang ditemukan belakangan, menunjukkan secara konklusif bahwa dukungan dan pendanaan itu terjadi, dan mendapatkan dukungan resmi.

Satu dokumen dari Ermera, misalnya, menunjukkan dengan jelas keterlibatan resmi militer di dalam pembagian dana dan barang kepada milisi. Dokumen ini

* Dikutip dalam SBS, *Dateline*, "Timor Terror Fund," 16 Februari 2000, transkrip, halaman 22.

† Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, "DIPDA [Daftar Isian Proyek Daerah] Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1999/2000" (Koleksi HRU, Doc. BOB #3).

adalah sepucuk surat dari Dandim Ermera kepada Bupati bertanggal April 1999, yang di dalamnya Dandim meminta uang sebesar Rp104 juta (USD13.866) untuk membiayai gaji bulanan para anggota Pam Swakarsa (yaitu milisi) yang baru direkrut di Kabupaten Ermera sebesar Rp200.000,00 (USD26,66) per orang. Dandim juga meminta 6.405 kg beras untuk dibagikan kepada anggota-anggota baru milisi.^{*} Sebagai dasar untuk permintaan tersebut, Dandim secara eksplisit menyebutkan perintah bertanggal 23 April 1999 dari Gubernur dan Danrem yang meminta pembentukan Pam Swakarsa.

Dokumen ini mengonfirmasikan bahwa, sementara pendanaan ‘sosialisasi’ secara resmi disalurkan melalui kantor Bupati, dalam beberapa hal pendanaan untuk milisi juga mengalir melalui hierarki TNI. Bukti tersebut konsisten dengan informasi dari sumber TNI dan milisi yang didapatkan oleh pengamat-pengamat internasional pada 1999. Dandim di Baucau, misalnya, berkata kepada para petugas Carter Center pada Juli 1999 bahwa para milisi di wilayahnya diorganisasikan, dilatih, dan dipasok oleh TNI. Mirip dengan itu, anggota-anggota milisi di Baucau mengatakan kepada Carter Center bahwa mereka pergi ke Kodim di Baucau setiap bulan untuk mengambil bayaran mereka.[†]

TNI juga mendukung ‘sosialisasi’ dan milisi dengan menyalurkan dananya sendiri ke pemerintah sipil. Proses ini terungkap dalam sebuah surat bertanggal 23 Juni 1999 dari Dandim Dili Letnan Kolonel Endar Priyanto kepada Bupati. Surat itu menjelaskan bahwa Dandim menyumbang Rp50 juta (USD6.666) kepada Bupati sebagai “dukungan Kodal,” seperti yang disepakati dalam rapat tentang persiapan untuk Konsultasi Rakyat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dana tersebut untuk membantu “terciptanya kondisi yang kondusif, aman dan terkendali” di Kabupaten Dili.[‡]

Walaupun masih terbatas, semakin bertambah bukti yang menunjukkan bahwa sebagian pendanaan dan dukungan material untuk milisi berasal dari sumber-sumber militer di Jakarta, termasuk badan intelijen militer BIA (namanya diubah menjadi BAIS dalam April 1999).

Sadapan DSD Australia tanggal 9 Agustus 1999, dilaporkan mengungkapkan bahwa Brigadir Jenderal Arifuddin, Direktur A BIA/BAIS, telah mengatur penyelenggaraan produksi beberapa ribu bendera pro-otonomi dan kaos oblong untuk dibagikan kepada milisi dan lain-lain di Timor-Leste.[§] Bukti itu mengonfirmasikan bahwa militer, dan khususnya intelijen militer, secara langsung terlibat dalam pemberian dukungan

* Hanya anggota yang baru direkrut, jumlahnya 175 orang di Ermera, yang akan menerima Rp200.000 (USD26,66) per bulan. Gaji untuk anggota lama yang berjumlah 136 orang disediakan Rp125.000 (USD16,66) per bulan. Surat dari Letnan Kolonel Muhamad Nur, Komandan Distrik Militer 1637 Ermera, kepada Bupati Ermera, “Permohonan Uang Saku PAM Swakarsa,” bertanggal Juni 1999. Salinan dari dokumen ini dimiliki penulis.

† Komunikasi pribadi dengan Carter Center, 26 Juli 1999.

‡ Dandim 1627/Dili (Letnan Kolonel Endar Priyanto) kepada Bupati Dili. Surat No. B/415/VI/1999, 23 Juni 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #32).

§ *Sydney Morning Herald*, “Silence Over Crimes Against Humanity,” 14 Maret 2002.

material kepada kelompok-kelompok pro-otonomi, termasuk milisi. Mungkin juga signifikan bahwa sampai Januari 1999, BIA/BAIS dikepalai oleh Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim. Karena pentingnya peran Makarim dalam merencanakan strategi militer dan milisi di Timor-Leste tahun 1999, bukan tidak masuk akal bahwa ia berperan dalam operasi-operasi BIA/BAIS untuk mendukung milisi.

Indikasi lebih jauh dari dukungan TNI dan BIA/BAIS kepada milisi muncul pada 2000, ketika sejumlah perwira Angkatan Darat dituduh memproduksi dan mendistribusikan uang palsu bernilai jutaan dolar. Salah seorang yang terlibat adalah Brigadir Jenderal Soemaryono, seorang perwira perencana di bawah Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo.^{*} Menurut laporan-laporan, ia membantu pembuatan uang palsu itu untuk membiayai milisi Timor-Leste. Kesaksian lain dalam kasus ini menunjukkan bahwa operasi ini dijalankan oleh badan intelijen BIA/BAIS, berdasarkan perintah dari Jenderal Wiranto. Setelah bersaksi dalam kasus tersebut pada akhir 2000, seorang pensiunan perwira intelijen dilaporkan mengatakan bahwa kepala BIA/BAIS, Letnan Jenderal Tyasno Sudarto, mengatakan kepadanya, "bahwa Jenderal Wiranto telah memilih BIA untuk menjalankan operasi uang palsu untuk membiayai milisi."[†]

Juga ada sejumlah bukti bahwa Jenderal Wiranto mungkin telah mengesahkan pengalihan dana negara untuk keperluan membiayai kampanye pro-otonomi. Dalam pemeriksaan pengadilan di akhir 2001 untuk suatu kasus korupsi, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Rahardi Ramelan mengatakan bahwa ia telah mengambil Rp10 miliar dari dana Bulog dan 'meminjamkan' dana itu kepada Jenderal Wiranto. Ia mengatakan diberitahu bahwa dana itu dipergunakan untuk membiayai kelompok-kelompok pro-otonomi di Timor-Leste.[‡]

Terakhir, ada bukti bahwa para pejabat militer senior yang lain berjanji memberikan dana besar untuk kelompok-kelompok milisi. Surat dakwaan untuk Jenderal Wiranto dan tujuh perwira lainnya yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat di Timor-Leste menuduh, misalnya, bahwa pada rapat di Dili pada November 1998, Panglima Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri menawarkan memberikan uang Rp50 juta kepada Eurico Guterres untuk memulai kerja membentuk kelompok-kelompok milisi.[§]

^{*} Lihat "Retired General Faces 4-year Term," *Indonesian Observer*, 28 November 2000; "Two ex-Army Colonels Nabbed Over Fake Money," *Jakarta Post*, 3 Juli 2000.

[†] "Two Ex-soldiers Jailed for Counterfeiting," *Jakarta Post*, 22 September 2000; "Alleged Counterfeiter Claims Army Used Him to Finance Timor Militia," AFP, 13 September 2000.

[‡] "Wiranto Akui Dana Rp. 10 M Untuk Konsultasi Rakyat Timtim," *Detikcom*, 31 Oktober 2001; dan "Soal Dana Bulog Rp. 54 Miliar: Rahardi – Diserahkan Kepada Akbar Tandjung dan Wiranto," *Kompas*, 10 Oktober 2001.

[§] "Selama kunjungan dengan para pemimpin pro Indonesia," demikian surat dakwaan itu, "DAMIRI memuji Eurico Guterres yang akan menjadi pemimpin milisi di masa depan sebagai pemuda yang bersedia berjuang untuk integrasi dan mengatakan bahwa dia bersedia memberikan lima puluh juta rupiah kepada Guterres untuk mulai pekerjaannya." Timor Leste, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003, paragraf 13.

TNI juga memiliki sejumlah mata anggaran resmi yang dialihkan untuk kepentingan pro-otonomi pada 1999. Salah satunya adalah 'Dana Satuan Operasi Pengamanan Pemilu 1999'. Walaupun namanya menunjukkan bahwa dana itu disediakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan umum Indonesia tahun 1999, dana itu juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Konsultasi Rakyat di Timor-Leste. Ketika Panglima Daerah Militer IX Mayor Jenderal Adam Damiri memerintahkan satu delegasi yang terdiri atas sejumlah perwira Kodam IX mengunjungi Timor-Leste pada awal Juni 1999 untuk memeriksa rencana pemilihan umum dan Konsultasi Rakyat, ia menyebutkan bahwa untuk membiayai keperluan ini digunakan dana Satuan Operasi Pengamanan Pemilu 1999.* Sangat mungkin bahwa dana yang sama—dan dana-dana lain yang belum kita ketahui—telah digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan Konsultasi Rakyat.

Keterlibatan militer dalam pendanaan dan pemasokan untuk milisi juga mengambil bentuk-bentuk yang lain, baik formal maupun informal. Sudah terbukti dengan sendirinya bahwa TNI membayar untuk senjata dan peralatan militer lainnya yang mereka bagikan kepada milisi. Beberapa satuan milisi—seperti Halilantar di Bobonaro, dan Rajawali serta Saka di Baucau—perlengkapannya sangat baik, dan dapat dilihat tampil dengan perlengkapan tempur yang lengkap atau hampir lengkap (pakaian seragam loreng, sepatu boot, dan lain-lain). Namun semua kelompok milisi diperlengkapi atau memiliki akses pada barang-barang yang mahal, termasuk peralatan radio komunikasi canggih yang biasanya hanya digunakan oleh pihak berwenang militer dan kepolisian.

Pihak berwenang militer dan kepolisian di Timor-Leste juga memberikan 'sumbangan' uang dan barang kepada kelompok-kelompok milisi. Dalam satu laporan kepada Komandan Kompi B Aitarak, bertanggal 2 Agustus 1999, seorang komandan milisi setempat memberikan satu daftar sumbangan yang telah diperoleh dari berbagai badan pemerintah dan bisnis untuk mendukung penyelenggaraan satu pesta yang diadakan di pos milisinya di Dili. Daftar itu berisi 14 nama dengan tandatangan, dan jumlah dana yang disumbangkan oleh masing-masing orang yang namanya disebutkan. Kantor dan pejabat yang masuk dalam daftar itu mencakup tokoh-tokoh pejabat sipil, kepolisian, dan militer penting di kota Dili: Kantor Walikota Dili, Kepala Kepolisian Resor Dili, dan Kodim Dili.†

Terakhir, pihak berwenang militer bisa dan sudah menggunakan otoritasnya terhadap badan-badan pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa dana dan barang disalurkan kepada kelompok-kelompok milisi bahkan ketika tidak ada anggaran resmi untuk pengeluaran semacam itu. Surat dari seorang bintang Kopassus kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Baucau pada Maret 1999, memberikan

* Panglima Kodam IX/Udayana (Mayor Jenderal Adam Damiri), "Surat Perintah No. Sprin/654/V/1999," 31 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #27).

† Komandan Peleton IV, Pos III, Aitarak (Nicolau P. Lobato) kepada Komandan Kompi B Aitarak. Laporan No. 03/Pos III/ATK/IV/1999, tentang "Laporan hasil dukungan," 2 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #219).

gambaran tentang proses tersebut.^{*} Surat itu meminta obat-obatan untuk keperluan terang-terangan ‘penggalangan’ penduduk dan ‘meningkatkan moril’ anggota dan simpatisan milisi setempat. Setelah menyebut kelompok-kelompok milisi Saka, Sera, dan Alfa, dan menyebut sejumlah 600 anggota keluarga dan ‘pendukung operasi,’ surat itu meminta obat-obatan untuk memfasilitasi “penggalangan terhadap/ kepada masyarakat serta meningkatkan moril para anggota dan simpatisan.”[†] Surat itu meninggalkan keraguan bahwa TNI, dan khususnya Kopassus, menggunakan otoritas kuatnya untuk mengarahkan dukungan material kepada milisi.

FPDK sebagai saluran pendanaan

Selain uang dan sumberdaya yang dialirkan melalui saluran-saluran pemerintah sipil dan militer, dukungan diberikan kepada milisi melalui berbagai sarana yang tidak langsung. Banyak darinya disalurkan melalui FPDK, salah satu dari dua organisasi pro-otonomi yang didirikan pada awal 1999. Memang ada alasan untuk meyakini bahwa, apapun hal lain yang dilakukannya, FPDK bekerja untuk keperluan yang tersembunyi—sebagai sarana penyaluran dana dan barang dari pemerintah dan militer kepada milisi. Ada alasan untuk meyakini bahwa BRTT juga bertindak sebagai suatu mekanisme dukungan, dan mungkin sebagai saluran dana, kepada milisi.

Beberapa bukti untuk pernyataan ini sifatnya tidak langsung. Misalnya, menurut penjelasannya sendiri, pada awal 1999 pemimpin FPDK, Basilio Araújo, pergi ke Jakarta untuk meminta uang dan senjata kepada para pejabat militer dan pemerintah. Ketika diwawancarai oleh seorang wartawan Australia pada saat itu, ia mengatakan bahwa ia cukup yakin bahwa permintaannya akan diterima secara positif.[‡] Pernyataan itu sendiri tidak membuktikan banyak hal. Tetapi, bersama dengan kesaksian bahwa Departemen Luar Negeri memberikan Rp9 miliar (USD1,2 juta) kepada FPDK, dan bukti dokumenter bahwa kelompok itu segera mendapatkan akses pada sejumlah besar dana dan perbekalan, yang dibagikan kepada para milisi, mengarahkan telunjuk pertanggungjawaban kepada pejabat-pejabat di Jakarta.

Beberapa bukti paling jelas bahwa FPDK membagikan dana dan perbekalan kepada milisi datang dari Kabupaten Covalima. Satu dokumen yang disusun oleh kantor FPDK Kabupaten Covalima, misalnya, berisi daftar nama 143 orang anggota milisi Laksaur (Kompi 2/Tilomar), yang masing-masing menerima uang sebesar Rp800.000 dari FPDK dalam waktu antara April dan Juli 1999.[§] Dokumen kedua

^{*} Surat itu berasal dari bintang kesehatan ‘Satuan Lapangan-A’ dari ‘Satuan Tugas Tribuana VIII’ Kopasus. Lihat Komandan Satuan Lapangan-A, Satuan Tugas Tribuana VIII kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II Kabupaten Baucau, “Permohonan Dukungan Obat Bulanan Pos Dan Kes Satlap-A,” Maret 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #14).

[†] Ibid.

[‡] ABC, *Four Corners*, “Licence to Kill,” 15 Maret 1999, transkrip, halaman 6.

[§] Lihat: Ketua FPDK-Covalima (Alberto de Neri), “Daftar: Nama Satuan Tugas Laksaur Merah Putih Kompi 2 Tilomar Yang Menerima Bantuan Biaya dari FPDK Kabupaten Covalima bulan April s/d Juli 1999,” [Agustus] 1999 (Koleksi SCU, Doc #182).

berasal dari kantor FPKD yang sama memuat daftar nama 16 orang pegawai negeri yang juga anggota milisi Laksaur yang masing-masing menerima Rp400.000 dari FPKD dalam periode empat bulan yang sama.^{*}

Dokumen-dokumen dari Dili menunjuk pada hubungan patronase yang sama antara FPKD dan kelompok milisi Aitarak. Dalam sepucuk surat kepada ketua tingkat provinsi FPKD, bertanggal 18 Agustus 1999, pemimpin Aitarak Eurico Guterres meminta Rp117.000.000 untuk membayar keperluan makan 600 anggota Aitarak yang akan tinggal di markas Aitarak selama masa kampanye 13 hari. Guterres menulis: "... kami mohon kepada Bapak Ketua Umum DPP FPKD Timor Timur dapat mencairkan dana operasional berupa biaya makan (konsumsi) dalam mendukung Kegiatan Anggota Komando Pasukan Aitarak." Nada nyata surat ini, dan fakta bahwa surat itu meminta "mencairkan dana operasional," dengan kuat menunjukkan bahwa ada satu mata anggaran di dalam FPKD untuk keperluan semacam itu, dan bahwa permintaan dari milisi merupakan kejadian yang rutin.[†]

Surat lain kepada ketua FPKD bertanggal 21 Agustus 1999 mengonfirmasikan kecurigaan itu. Dalam surat itu, Guterres meminta 'tambahan' 120 kaos oblong pro-otonomi; 70 darinya untuk anggota Aitarak "yang belum mendapatkan pembagian" dan 50 untuk penduduk desa Motael, Dili. Bahasa di dalam surat itu—dan khususnya kata 'tambahan'—menghilangkan keraguan bahwa FPKD telah memberikan kaos oblong kepada para anggota Aitarak dalam kesempatan yang sebelumnya. Lebih jauh, dengan menyebutkan 70 anggota milisi yang belum menerima pakaian tersebut, surat itu secara tersirat namun jelas menunjukkan bahwa anggota Aitarak yang lain—yang berjumlah sekitar 1.500 orang—telah menerima kaos oblong dari FPKD.[‡]

Surat 21 Agustus 1999 signifikansinya bahkan lebih besar ketika diletakkan bersama dengan bukti yang telah disebutkan bahwa Brigadir Jenderal Arifuddin, Direktur A badan intelijen militer, BAIS, telah mengatur pembuatan sejumlah 5.000 kaos oblong pro-otonomi pada 1999. Bukti tersebut dapat menunjukkan dengan baik bahwa FPKD adalah penyalur pemberian dana dan material dari BAIS itu sendiri, atau dari para pejabat tinggi TNI seperti Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang punya hubungan dekat dengan badan tersebut.

.....
^{*} "Nama Satuan Tugas Laksaur Merah Putih Kompi 2 Tilomar Yang Menerima Bantuan Biaya Dari FPKD Kabupaten Covalima Bulan April s/d Juli 1999 Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil." (Koleksi SCU, Doc #182).

[†] Lihat: Komandan, Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Ketua Umum DPP FPKD Timor Timur, tentang "Mohon Dukungan Dana," 18 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #47).

[‡] Bagian yang relevan dari surat itu: "Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Umum DPP FPKD Timor Timur dapat memberikan dukungan tambahan Baju kaos Otonomi sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah untuk anggota Aitarak yang belum mendapatkan pembagian sebanyak 70 Orang dan Masyarakat Desa Motael sebanyak 50 orang." Lihat: Komandan Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Ketua Umum DPP FPKD Timor Timur. Surat No. 57/MK-AT/VIII/1999, tentang "Mohon Dukungan Baju Kaos Otonomi," 21 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #156).

Anggaran milisi

Beberapa bukti yang menunjuk pada pendanaan resmi milisi ada dalam bentuk permintaan dan proposal anggaran yang diajukan kepada pihak berwenang sipil dan militer oleh kelompok-kelompok milisi. Permintaan dan proposal itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dukungan pemerintah akan datang. Namun, dipandang dalam konteks pola pendanaan resmi seperti yang sudah diuraikan—dan dengan memperhatikan nada dan bahasa rutin yang sama dalam permintaan-permintaan ini—permintaan dan proposal itu memberikan dukungan lebih jauh untuk pernyataan bahwa milisi menerima dana dan dukungan logistik resmi. Permintaan dan proposal itu juga memberikan pemahaman tentang jangkauan dan sifat dari pendanaan dan dukungan material lainnya yang mungkin sudah diberikan.

Penting dicatat bahwa banyak dari permintaan ini disampaikan kepada TNI, dan khususnya kepada para komandan Kodim dan Korem. Dalam sepucuk surat kepada Dandim Dili, bertanggal 16 Agustus 1999, pemimpin Aitarak Eurico Guterres meminta agar TNI membayar gaji 76 orang anggota Aitarak yang belum menerima pembayaran melalui jalur normal. Hanya 1.445 dari 1.521 anggota Aitarak yang sudah menerima gaji, keluhnya, dan Walikota Dili mengatakan bahwa tidak cukup uang untuk membayar mereka. Di samping mengonfirmasikan bahwa milisi secara normal dibayar melalui aparat pemerintah sipil, surat itu mengungkapkan bahwa TNI dianggap sebagai sumber pendanaan yang terakhir bagi milisi.*

Dokumen-dokumen yang lain menunjukkan bahwa para pemimpin milisi sudah terbiasa dengan TNI membiayai pengeluaran rutin operasionalnya. Dalam sepucuk surat kepada kepala badan perlistrikan negara PLN di Dili, bertanggal 12 Agustus 1999, Eurico Guterres menjelaskan dalam nada biasa bahwa rekening listrik yang belum dibayar untuk dua rumah di Dili semestinya disampaikan kepada Korem, karena kedua rumah tersebut dipergunakan sebagai pos Aitarak. Kami tidak memiliki bukti bahwa Korem benar-benar membayar rekening ini, tetapi nada dari surat tersebut—dan fakta bahwa surat tersebut ditembuskan kepada para pejabat senior termasuk Gubernur—dengan kuat menunjukkan bahwa membiayai pengeluaran semacam itu sudah rutin bagi TNI.†

Para pemimpin milisi juga membuat permintaan yang sama untuk dukungan logistik dari para pejabat pemerintah sipil. Di akhir April 1999, misalnya, komandan kompi A Aitarak dan komandan pos milisi di Desa Vila Verde, Dili, menulis surat kepada kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan meminta ruang kantor dan sebuah kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pro-otonomi. Kedua pemimpin milisi itu menjelaskan bahwa

* Lihat: Komandan, Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Dandim 1627/Dili. Laporan No. 148 SL/MK-AT/VIII/1999, 16 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #26).

† Lihat: Komandan Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Kepala PLN Wilayah IX Cabang Dili Tim-Tim. Surat No.147/SP/MK-AT/VIII/1999, 12 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #83).

kendaraan yang mereka dapatkan seharusnya adalah kendaraan yang disita dari seorang pegawai negeri sipil, yang menurut mereka, telah menggunakannya untuk kegiatan prokemerdekaan.*

Contoh lain dari permintaan semacam itu datang dari sepucuk surat bertanggal 10 Agustus 1999, dari Eurico Guterres kepada Walikota Dili. Dalam surat itu, Guterres meminta Rp60 juta (USD8.000) untuk menutupi biaya bahan bakar personel Aitarak yang menggunakan 50 mobil dan 100 sepeda motor selama periode kampanye. Seperti permintaan-permintaan lain yang sudah disebutkan, permintaan ini pun tampaknya adalah permintaan rutin untuk 'mencairkan' dana, bahasa yang lagi-lagi menunjukkan bahwa ada mata anggaran yang sudah tersedia untuk keperluan semacam itu.†

Permintaan bantuan yang terbesar sejauh yang ditemukan adalah dua proposal anggaran yang disusun oleh Aitarak dan ditandatangani oleh Eurico Guterres. Satu disampaikan kepada Gubernur Timor Timur pada 18 Mei 1999, dan yang lainnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), provinsi Indonesia yang bersebelahan dengan Timor-Leste, pada 30 Juni. Proposal kepada Gubernur Timor Timur meminta dana sejumlah Rp477.490.000 (USD63.665) untuk membiayai berbagai macam kebutuhan meliputi: empat buah kendaraan roda empat, 20 buah sepeda motor, dana 'sosialisasi otonomi,' dua buah komputer, empat buah mesin ketik, lima buah lemari, lima buah meja, lima buah kipas angin, dua buah meja komputer, dan lain-lain. Proposal yang diajukan kepada Gubernur NTT meminta dana sejumlah Rp1.009.990.000 (USD134.665) mencantumkan satu daftar yang sama tetapi padanya ditambahkan: gaji untuk 1.522 orang anggota Aitarak, serta biaya telepon, air, listrik, pemeliharaan kendaraan, dan 'biaya tidak terduga.'‡

Proposal-proposal anggaran yang besar itu sendiri tidaklah membuktikan bahwa pendanaan pemerintah sudah diberikan. Namun, seperti banyak permintaan lain yang lebih kecil yang sudah diuraikan, proposal-proposal itu memberi tahu kita bahwa Guterres, dan mungkin pemimpin milisi yang lain, memiliki alasan untuk berharap bahwa dirinya akan mendapatkan sesuatu dari pihak yang berwenang. Lebih jauh, mengingat kenyataan bahwa Aitarak pada akhirnya mendapatkan mobil, sepeda motor, ruang kantor, perlengkapan kantor, dan gaji untuk sekitar 1.500 anggota, bukannya tidak beralasan untuk menyimpulkan bahwa setidaknya sebagian dari permintaan tersebut telah disusul dengan penyaluran dana dari sumber-sumber resmi.

* Lihat: Danki Kompi A Aitarak, Danpos Aitarak Desa Vila Verde, dan Komandan Aitarak, Sector B (Eurico Guterres) kepada Kakanwil Depdikbud. Surat No. /PVV/AT/IV/199 tentang "Permohonan Dukungan Sarana untuk Pos Aitarak Desa Vila Verde," 26 April 1999 (Koleksi SCU, Doc #170)

† Lihat: Komandan, Komando Pasukan Aitarak Sektor B (Eurico Guterres) kepada Walikota Administratif Dili. Surat No. 142/MK-AT/VIII/1999, tentang "Mohon Dukungan Biaya Bahan Bakar Kendaraan," 10 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #172).

‡ Lihat: Komandan, Komando Pasukan Aitarak, Sektor B (Eurico Guterres) kepada Gubernur Timor Timur. Surat No. 16/SP/AT/V/1999, 18 Mei 1999 (Koleksi SCU, Doc #38); dan Wakil Panglima, Komando Pasukan Pejuang Integrasi (Eurico Guterres) kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Surat No. 55/SP/MK-AT/VI/1999, 30 Juni 1999 (Koleksi SCU, Doc #39).

Bukti-bukti yang dikemukakan dalam bab ini meninggalkan sedikit keraguan bahwa pihak berwenang sipil dan militer Indonesia, sampai pada dan termasuk Kantor Kepresidenan, menyediakan landasan material dan finansial yang penting bagi milisi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kedok kampanye 'sosialisasi.' Lebih khususnya, bukti-bukti itu mengarah pada kesimpulan-kesimpulan berikut ini.

Pertama, banyak dari pendanaan resmi—diperkirakan Rp39 miliar atau USD5,2 juta—disalurkan melalui birokrasi pemerintah sipil di Timor-Leste, dengan persetujuan eksplisit dari Gubernur dan para Bupati. Sebagian, mungkin sebagian besar, dari dana-dana itu diambil atau dialihkan dari anggaran dan program pemerintah daerah yang sudah ada, termasuk proyek 'Jaring Pengaman Sosial' yang dibiayai oleh Bank Dunia, dan anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Pendidikan dan Kebudayaan serta Pekerjaan Umum. Karena sangat sentralistisnya struktur birokrasi Indonesia, pengaturan-pengaturan ini tidak akan dapat terjadi tanpa persetujuan dari pejabat-pejabat pemerintah pusat di Jakarta.

Kedua, ada bukti bahwa beberapa departemen dan instansi pemerintah Indonesia—termasuk Departemen Transmigrasi, Departemen Penerangan, Departemen Luar Negeri, dan badan intelijen militer BAIS—memberikan dukungan yang bersemangat, dan dana, untuk 'sosialisasi,' yang mencakup milisi. Lebih lanjut, ada bukti dokumenter bahwa setidaknya sebagian dari uang yang dipergunakan untuk mendukung milisi di Timor-Leste berasal langsung dari Jakarta di bawah selubung program pembangunan yang didanai oleh Kantor Kepresidenan.

Ketiga, bukti dokumenter dan kesaksian menunjukkan bahwa sebagian pendanaan untuk milisi juga disalurkan, secara langsung maupun tidak langsung, melalui TNI. Di sejumlah kabupaten anggota-anggota milisi menerima gaji bulanan dan jatah berasnya di kantor Kodim. TNI juga memberikan dukungan material dalam bentuk 'sumbangan' sukarela kepada kelompok-kelompok milisi, dengan menggunakan wewenangnya untuk mengalihkan perbekalan kepada milisi dari badan-badan pemerintah yang lain, dan dengan memasok milisi dengan senjata, peralatan tempur, pakaian, peralatan radio, perbekalan medis, transportasi, dan bantuan logistik lainnya.

Terakhir, pendanaan dan perbekalan tambahan disalurkan melalui kelompok pro-otonomi, FPDK. Di sebagian kabupaten, seperti Covalima, FPDK membayar gaji bulanan milisi setempat. Di tempat lain, FPDK memberikan kaos oblong, bendera, dan berbagai pernik-pernik pro-otonomi. Lebih jauh, ada bukti untuk menyatakan bahwa FPDK berlaku sebagai saluran tersembunyi untuk pembagian dana dan perbekalan kepada milisi dari berbagai instansi pemerintah pusat, termasuk Departemen Luar Negeri dan badan intelijen utama militer BAIS.

Ringkasan kabupaten

Pengkajian mengenai pola luas kekerasan pada 1999 dan mengenai hubungan-hubungan yang mendasarinya, dapat menciptakan pengertian yang menyestatkan tentang keseragaman situasi di seluruh Timor-Leste. Bab ini bertujuan mengoreksi ketidakseimbangan tersebut, dan memberikan gambaran yang lebih bernuansa dan kompleks tentang kejadian-kejadian pada 1999, dengan mempelajari keadaan hak asasi manusia pada 1999 di semua kabupaten Timor-Leste: Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Dili, Ermera, Manufahi, Manatuto, Lautém, Liquiçá, Oecussi, dan Viqueque.

Setiap ringkasan kabupaten terdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama menggambarkan kelompok-kelompok milisi utama yang beroperasi di kabupaten bersangkutan pada 1999, dan memeriksa hubungan antara kelompok-kelompok tersebut dengan pihak-pihak berwenang militer, kepolisian, dan sipil setempat. Bagian kedua memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa dan perkembangan hak asasi manusia yang penting di masing-masing kabupaten pada 1999, dengan menyoroti tema-tema umum dan insiden-insiden kekerasan yang spesifik. Selain menambah kompleksitas pada gambaran mengenai kejadian-kejadian 1999, ringkasan-ringkasan ini juga menggambarkan dengan sangat jelas pola-pola umum dan hubungan-hubungan yang dibahas dalam bagian awal laporan ini.

Aileu (Kodim 1632)

- Dandim: Mayor Maman Rahman
- Bupati: Kolonel (Purn.) Suprpto Tarman
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Hermanu, SH
- Milisi: AHI
- Jumlah yang dibunuh: 28 orang

Dibandingkan beberapa kabupaten yang lain, tingkat kekerasan politik di Aileu relatif rendah pada 1999.* Dua puluh delapan orang dibunuh selama 1999, dengan jumlah terbesar di satu kecamatan (Aileu Kota). Di lain pihak, kabupaten ini menderita tingkat penghancuran fisik yang sebanding dengan kabupaten-kabupaten lain, dan beberapa ribu orang dipaksa meninggalkan rumah dan mengungsi ke gunung-gunung atau ke Timor Barat. Pelaku utama kekerasan di Aileu adalah para prajurit TNI dan, pada tingkat yang lebih kecil, para anggota milisi lokal, AHI. Anggota Brigade Mobil (Brimob) Polri juga menjadi pelaku langsung beberapa tindak kekerasan.

* Kecuali disebutkan lain, penjelasan ini berdasar pada UNTAET, DHRO Aileu, "A Profile of Human Rights Violations in Aileu District During 1999," Desember 2001.

Milisi dan pihak berwenang

Kelompok milisi utama di Kabupaten Aileu, AHI (Aileu Hametin Integrasaun – Aileu Memperkuat Integrasi), secara resmi didirikan pada April 1999, dan diperkirakan berkekuatan sekitar 260 anggota. Seperti banyak kelompok milisi baru yang muncul saat itu di Timor-Leste, AHI dibentuk mengikuti organisasi paramiliter dan milisi yang sudah ada sebelumnya. Yang paling penting dari organisasi-organisasi ini di Aileu adalah Gadapaksi, satu kelompok pemuda setengah militer yang didirikan pada 1995. Pada saat pembentukan AHI, semua anggota dari kelompok yang lama bergabung dalam kelompok yang baru. Menegaskan kelanjutan antara yang lama dan yang baru, para pemimpin AHI tahun 1999 mencakup para mantan komandan kelompok-kelompok lama.*

Secara resmi, AHI mendapat dukungan dari pihak berwenang sipil yang utama, termasuk Bupati, Kolonel (Purn.) Suprpto Tarman, dan para pejabat pemerintahan setempat.† AHI mendapatkan ruang kantor di kota Aileu dan di setiap kecamatan. Pihak berwenang kabupaten ini juga memberikan dua mobil kepada AHI, yang digunakan oleh para pemimpin utamanya, dan seperti milisi di manapun AHI menerima dana dan beras yang disalurkan melalui kantor Bupati.

Terlepas dari tanda-tanda dukungan pemerintah semacam itu, dukungan pihak berwenang kepada AHI tidak sekuat seperti di kabupaten-kabupaten lain. Setidaknya beberapa pejabat pemerintah jelas bersikap mendua terhadap milisi. Dandim Mayor Maman Rahman tidak tampak sebagai pendukung kuat milisi, dan tindakan yang di masa lalu dilakukan Bupati Kolonel Suprpto Tarman bermacam-macam. Walaupun ia mengancam akan melakukan kekerasan hebat terhadap tokoh-tokoh prokemerdekaan pada Agustus, dan memperlihatkan sikap siap berperang secara ekstrem di masa setelah pemungutan suara, ia bukan seorang yang cepat menyambut gagasan mengenai kekuatan milisi. Kenyataannya ia tidak mengesahkan pembentukan milisi AHI sampai April, dan ini agaknya hanya untuk menjaga agar milisi lain—terutama Aitarak yang berbasis di Dili—tidak beroperasi di kabupatennya. Sikap mendua ini tampak membatasi kekuatan AHI, dan karena itu mungkin membantu menjelaskan relatif kecilnya jumlah pembunuhan di kabupaten ini.

Beberapa aspek tertentu dari kepemimpinan dan komposisi milisi AHI mungkin turut berperan dalam hal ini. Sebagai contoh, komandan milisi AHI, Tomás Mendonça, dilaporkan ragu-ragu membagikan senjata kepada anggota milisi. Mendonça, yang mantan pegawai negeri sipil dan mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aileu, tidak begitu agresif atau tidak cepat menggunakan kekerasan seperti pemimpin milisi di kabupaten-kabupaten lain. Perilaku AHI mungkin juga dibatasi oleh kenyataan bahwa Aileu adalah wilayah basis utama CNRT dan Falintil. Bahkan, menurut berbagai keterangan, anggota CNRT dan Falintil berhasil menyusup ke satuan-satuan milisi AHI, dan setidaknya

* Mereka mencakup Horacio de Araújo, seorang bekas pemimpin Gadapaksi, yang menjadi orang ketiga dalam komando AHI.

† Kolonel Suprpto Tarman sebelumnya bertugas sebagai Dandim di Manufahi dan Kepala Staf Korem 164/WD.

satu komandan AHI (orang kedua dalam jajaran komandonya, Julio Oscar Galucho) disebut sebagai seorang agen bawahan Falintil.

Bagaimanapun AHI mendapatkan dukungan dari beberapa perwira reguler TNI, termasuk Kepala Staf Kodim, Kapten Solapidin Dolok Seribu. Di tempat-tempat tertentu, perwira dan prajurit TNI secara langsung terlibat dalam penggalangan dan koordinasi kegiatan milisi. Komandan Rayon Militer Aileu, Sersan Mayor Alex Cocoleu, adalah seorang pendukung kuat milisi. Di Kecamatan Laulara, AHI secara tidak resmi dikoordinasi oleh seorang Babinsa, Prajurit José Aleixo; sementara di Kecamatan Seloi Kraik, AHI dikoordinasi oleh bintanga TNI, Sersan Pedro Araújo.

Basis dukungan terkuat milisi AHI di Aileu mungkin dari satuan Kopassus yang ditempatkan di sana dan dari kelompok milisi yang berpusat di Dili, Aitarak, yang merupakan buatan Kopassus. Kenyataan bahwa Aitarak mulai beroperasi di Kecamatan Laulara, Aileu, awal 1999, mendorong Bupati menerima seruan Kopassus untuk membentuk kelompok milisi lokal. Aitarak juga berperan penting dalam pembentukan AHI, dan anggota-anggota Aitarak datang ke Aileu secara berkala pada 1999 untuk memeriksa operasi-operasi AHI.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Mungkin karena kelemahan AHI dan kekuatan relatif Falintil dan CNRT di kabupaten tersebut, sepanjang periode pra-pemungutan suara tidak tercatat adanya pembunuhan. Namun, bulan-bulan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari kekerasan. Sering ada laporan mengenai penahanan, pemukulan, dan penyiksaan terhadap orang-orang yang diduga anggota CNRT dan Falintil. Kadang-kadang pemukulan ini terjadi di markas AHI, tetapi sering pula pemukulan terjadi di markas Kodim atau di salah satu markas Koramil. Juga dilaporkan terjadinya beberapa tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan yang bersimpati pada CNRT.

Sebagaimana di daerah lain di seluruh Timor-Leste, hari pemungutan suara keadaannya relatif damai di Aileu, dan ketenangan ini berlanjut setidaknya sampai 3 atau 4 September 1999. Namun, saat hasil pemungutan suara diumumkan, keadaan berubah dengan dramatis. Menurut beberapa keterangan, kekerasan dimulai pada hari tersebut dengan pembunuhan sistematis terhadap binatang ternak. Para prajurit TNI memulai pembantaian, dengan menggunakan senjata berkekuatan tinggi, dan kemudian memberikan senjata kepada milisi untuk melanjutkan tugas tersebut. Sejak itu, kekerasan dengan cepat meningkat.

Prajurit TNI dan Polri sering berperan langsung dalam kekerasan. Para perwira TNI dilaporkan memerintahkan pemimpin milisi Tomás Mendonça mengorganisasi pembakaran gedung-gedung di kota Aileu. Para perwira Polisi Sipil UNAMET melaporkan bahwa Polisi Indonesia hanya berdiri membiarkan milisi membakar habis kantor CNRT di kota Aileu. Pada 8 September Kapten Dolok Seribu dan Sersan Mayor Cocoleu mengumpulkan sekitar 20 prajurit TNI di Kodim. Setelah mereka berkumpul, Sersan Mayor Cocoleu dilaporkan memberi perintah untuk bergerak membakar dan membunuh.

Antara 4 dan 14 September, setidaknya 15 orang dibunuh di kabupaten ini. Sebelas dari 15 orang itu dibunuh di Kecamatan Aileu Kota, dan empat lainnya dibunuh di Kecamatan Laulara. Tampaknya, tidak ada yang dibunuh di Kecamatan Lequidoe dan Kecamatan Remexio. Informasi yang tersedia tentang pembunuhan yang dilaporkan itu lagi-lagi menunjuk pada peran langsung aparat keamanan. Para perwira TNI atau Polri secara langsung terlibat dalam setidaknya 8 dari 15 pembunuhan, dan mereka adalah pelaku tunggal dalam sedikitnya lima kasus. Misalnya pada 9 September Domingos Maukinta ditembak mati di dekat Desa Hohulu, di Kecamatan Aileu Kota oleh seorang sersan TNI yang beroperasi bersama sejumlah milisi. Pembunuhan terjadi dalam operasi pembakaran dan pemindahan paksa yang dilakukan bersama oleh TNI-milisi di bawah pimpinan Sersan Mayor TNI Alex Cocoleu.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, periode setelah pemungutan suara juga ditandai dengan perusakan besar-besaran harta benda, intimidasi, dan pemindahan paksa. Dalam hal ini peran TNI dan Polri juga tampak jelas. Pembakaran kota Aileu dimulai pada 5 September dan dilaksanakan dengan sengaja dan sistematis. Prajurit-prajurit TNI dan milisi tiba di desa-desa dengan membawa kaleng-kaleng berukuran lima liter berisi bensin atau minyak tanah, yang mereka siramkan ke gedung-gedung sebelum menyulut dan membakarnya. Desa-desa yang berada di sekitar kota Aileu dibakar satu demi satu pada hari-hari selanjutnya.

Dengan latar belakang seperti ini, TNI dan milisi mulai meringkus ribuan penduduk desa dan mengangkut mereka, atau memaksa mereka untuk berjalan, menuju ke kota Aileu. Seperti juga di sejumlah kabupaten lain, penduduk yang tinggal paling dekat dengan jalan-jalan utama adalah yang paling banyak diringkus. Setelah menunggu di Aileu selama beberapa hari, pada 14 September mereka yang diringkus dipindahkan dari Aileu ke Dili. Beberapa hari kemudian mereka dinaikkan ke truk-truk dan diangkut dari Dili ke Atambua di Timor Barat.

Ainara (Kodim 1633)

- Dandim: Letnan Kolonel Paulus Gatot Rudianto
- Bupati: Evaristo Doutel Sarmiento
- Kapolres: Mayor (Pol.) Drs. Rizali, SH
- Milisi: Mahidi, Laksaur
- Jumlah yang dibunuh: 34 orang

Kabupaten Ainara mengalami tingkat kekerasan dan penghancuran yang jauh lebih tinggi daripada Kabupaten Aileu.* Setidaknya 34 orang dibunuh pada 1999. Hampir semua korban diketahui atau diduga pendukung kemerdekaan. Lebih daripada setengah dari pembunuhan ini (18 orang) terjadi di Kecamatan Ainara.

* Kecuali dikemukakan lain, penjelasan ini didasarkan pada: UNTAET, DHRO-Ainara, "Report on Human Rights Violations in 1999, Ainara District," Mei 2001.

Diperkirakan 13.000 orang dipindahkan secara paksa di masa setelah pemungutan suara, dan sekitar 3.700 bangunan dibakar atau dihancurkan. Para anggota TNI dan kelompok milisi setempat, Mahidi, bertanggung jawab atas mayoritas besar pelanggaran hak asasi manusia di kabupaten tersebut, termasuk pembunuhan, upaya pembunuhan, penyiksaan dan penganiayaan, intimidasi, pemindahan paksa, dan perusakan tempat tinggal dan harta benda.

Milisi dan pihak berwenang

Kelompok milisi utama di Kabupaten Ainaro adalah Mahidi (Mati Hidup Integrasi dengan Indonesia). Mahidi secara resmi didirikan dalam sebuah upacara di Cassa pada Desember 1998.^{*} Upacara peresmianya tercatat dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, termasuk tokoh nasional pro-otonomi Francisco Lopes da Cruz. Namun unsur-unsur unit intelijen, SGI, yang dipimpin oleh Kopassus, disebut sebagai penyelenggara utama acara itu.[†] Pada saat peresmian, kelompok milisi itu disebut sebagai 'Halilintar 612' dan 'Batalion 612' yang mengesankan hubungan dengan TNI di Bobonaro.

Selama beberapa bulan berikutnya, cabang-cabang milisi Mahidi didirikan di tiap kecamatan dan desa di Ainaro. Pertengahan 1999 Mahidi diperkirakan berkekuatan setidaknya 1.000 orang yang dibagi ke dalam struktur bergaya militer, mulai dari Kompi, Peleton, dan Sel.[‡] Ada empat kompi utama (A, B, C dan D) ditambah satu kompi markas dan satu kompi perempuan.

Mahidi berada di bawah komando Cancio Lopes de Carvalho.[§] Adiknya, Nemesio de Carvalho, adalah wakil komandan Mahidi yang berbasis di Cassa dan bertanggung jawab untuk operasi di bagian selatan kabupaten ini. Wakil komandan kedua, Daniel Pereira, yang bermarkas di Manutassi, bertanggung jawab untuk operasi di bagian utara.

Seperti banyak milisi yang muncul pada 1999, Mahidi memiliki akar historis yang dalam dan hubungan yang telah lama dengan militer Indonesia. Asal-usulnya setidaknya dimulai pada 1991, ketika sebuah organisasi milisi yang bernama 'Organisasi Sukarelawan' dibentuk di Ainaro. Pemimpin kelompok tersebut tidak

* Sumber-sumber berbeda dalam menyebutkan tanggal tepat upacara tersebut. Banyak saksi yang mengatakan bahwa peresmian itu terjadi pada 17 Desember, tetapi yang lain mengatakan 31 Desember 1998. Satu memo tulisan tangan yang rinci dari Juli 1999 menyatakan bahwa Mahidi pertama kali dibentuk di Cassa pada 31 Desember (Koleksi SCU, Doc #268).

† Mereka mencakup Letnan Kolonel Nyus Rahasia, seorang perwira Kopassus—dan wakil Komandan TNI Sektor B—yang juga melatih milisi di Manatuto pada Mei dan Juni 1999. (Lihat ringkasan kabupaten: Manatuto.)

‡ Pada April 1999, beberapa laporan memperkirakan kekuatan Mahidi sekitar 2.000 orang dengan 500 pucuk senjata, tetapi organisasi-organisasi non-pemerintah setempat mengatakan bahwa angka sesungguhnya mendekati 1.000 orang dan 37 pucuk senjata. UNTAET Peace Keeping Force, *Militia Handbook*, Dili, 5 April 2001.

§ "Setelah terjadinya pembantaian Santa Cruz, [Cancio Carvalho] bekerjasama dengan SGI (Intelijen Militer) dalam tindakan mereka memburu aktivis pro-kemerdekaan. Sejak 1996, ia tinggal di Kupang di mana ia bekerja di Departemen Kehakiman, sampai dengan jatuhnya Suharto." UNTAET, *Militia Handbook*.

lain adalah Cancio Carvalho, Komandan Mahidi. Lebih jauh, seperti Mahidi, wilayah basis Organisasi Sukarelawan adalah Desa Cassa di Kecamatan Ainaro. Bersama dengan Desa Manutassi, Desa Cassa juga salah satu basis kekuatan partai pro-Indonesia Apodeti pada 1975-1976. Pada pertengahan dasawarsa 1990-an, mereka yang kemudian menjadi pemimpin dan anggota Mahidi ambil bagian dalam program pelatihan militer yang diselenggarakan SGI di Aileu.

Jalanan kuat dengan militer ini sangat nyata terlihat pada 1999. Para perwira TNI menunjukkan dukungan mereka kepada Mahidi dengan menghadiri upacara peresmian, dan dengan mengadakan pertemuan bersama untuk 'sosialisasi' opsi otonomi. Di antara mereka yang hadir dalam pertemuan-pertemuan semacam itu adalah Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Paulus Gatot Rudianto.

TNI juga penting dalam pelatihan Mahidi, dan dalam perencanaan serta pelaksanaan operasi-operasinya. Satu pelatihan yang dijalankan oleh perwira-perwira Kodim, secara langsung diamati oleh para pejabat UNAMET pada Juni 1999. Pelatihan milisi juga dilaporkan diselenggarakan di kabupaten ini oleh perwira-perwira Kopassus yang bertugas di Sektor B. TNI juga merupakan sumber utama pasokan senjata bagi Mahidi. Seorang mantan anggota Hansip mengatakan kepada penyidik PBB bahwa sejak akhir Desember 1998 senjata-senjata sudah dipasok kepada para komandan Mahidi, yang kemudian membagikannya ke kecamatan-kecamatan (Lihat Bab 7). Para pejabat UNAMET dan lainnya secara rutin menyaksikan anggota-anggota TNI dan Mahidi mengadakan patroli bersama.

Mahidi juga mendapatkan dukungan dari Polri, atau setidaknya mereka bisa beroperasi tanpa khawatir akan adanya campurtangan Polri. Seperti di wilayah Timor-Leste yang lain, Polri di Ainaro jelas-jelas tidak berniat bertindak mencegah atau menghentikan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan milisi, atau menyelidiki laporan adanya tindakan semacam itu. Seorang mantan anggota Polri di Ainaro mengonfirmasi apa yang sudah dicurigai sejak lama ketika mengatakan kepada para penyidik PBB bahwa Polri mendapat instruksi untuk melindungi dan membantu kelompok-kelompok pro-otonomi, dan menutup mata atas kejahatan terhadap para pendukung kemerdekaan.

Tentu saja ada perkecualian. Sejumlah anggota Polri asal Timor-Leste adalah pendukung kemerdekaan dan melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk membatasi atau mencegah kekerasan milisi. Tetapi konsekuensi dari usaha-usaha semacam itu bisa bersifat fatal. Pada 6 September 1999 misalnya, seorang petugas Polri di kampung Hatu-fae, Kecamatan Maubisse, ditembak mati ketika berusaha mencegah penjarahan dan pembakaran desa yang dilakukan oleh milisi. Khawatir akan mengalami nasib serupa, beberapa polisi yang bersimpati pada prokemerdekaan lari ke bukit-bukit atau ke Timor Barat ketika kekerasan meledak.

Selain bantuan yang diterima dari TNI dan Polri, Mahidi juga mendapat dukungan efektif dari pejabat penting pemerintah sipil, dan dari dua kelompok utama pro-otonomi, yaitu FPDK dan BRTT. Kenyataannya, kepemimpinan kelompok-kelompok yang berbeda ini saling tumpang tindih begitu signifikan, sehingga bisa dikatakan mereka sesungguhnya membentuk sebuah entitas tunggal yang berjaln kuat.

Camat Ainaro dan Hatobuilico misalnya, juga menjadi koordinator Mahidi di wilayah masing-masing. Dua wakil komandan Mahidi, Nemesio Carvalho dan Daniel Pereira, juga menjadi pemimpin FPDK, yang mendapatkan dukungan resmi pemerintah. Lebih daripada itu, keduanya adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ainaro. Akhirnya, pemimpin BRTT di Kabupaten Ainaro tidak lain adalah Bupati, Evaristo Doutel Sarmento.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Seperti di kebanyakan wilayah Timor-Leste, pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi sepanjang 1999, namun dengan puncak intensitas dan frekuensi pada periode pra-UNAMET dan setelah pemungutan suara. Sebanyak 34 pembunuhan tercatat terjadi dalam periode tersebut. Dalam periode ini pula terjadi peningkatan kasus-kasus penculikan, pemukulan, intimidasi, pemindahan paksa, kekerasan seksual, dan perusakan harta benda. Kekerasan paling buruk terpusat di dua kecamatan, yaitu Ainaro dan Maubisse, tetapi semua kecamatan mengalami kekerasan dan perusakan yang serius.

Periode pra-UNAMET ditandai suasana ketakutan dan intimidasi. Sedikitnya lima orang, semuanya pendukung kemerdekaan, dibunuh selama periode ini. Dua dari lima korban tersebut dibunuh dalam satu insiden pada 3 Januari 1999. Mereka terbukti dijadikan sasaran karena memprotes pembentukan milisi Mahidi di Cassa. Tiga korban lainnya dengan sengaja dibunuh setelah ditahan dan dipukuli oleh prajurit-prajurit TNI dan anggota-anggota Mahidi.

Seperti di bagian lain Timor-Leste, insiden pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi lebih sedikit dalam periode UNAMET, namun pemukulan, penculikan, dan intimidasi oleh milisi dan TNI tetap berlanjut. Sasaran utama dari tindakan-tindakan ini adalah para pemimpin CNRT, aktivis mahasiswa yang berhubungan dengan DSMPTT, dan staf UNAMET. Pada 5 Agustus misalnya, milisi Mahidi menyerang suatu pertemuan di kota Ainaro yang diselenggarakan oleh DSMPTT, melukai seorang Polisi Sipil UNAMET. Polri gagal bertindak, dan menolak menyelidiki serangan itu dengan alasan bahwa UNAMET tidak seharusnya menghadiri pertemuan tersebut. Kemudian, ketika masa kampanye dalam bulan Agustus, satu kelompok Mahidi membakar habis kantor CNRT.

Hari pemungutan suara lebih menegangkan di Ainaro dibandingkan di banyak kabupaten lain. Di samping meluasnya intimidasi dan pengacungan senjata oleh TNI dan milisi, ada usaha yang tidak berhasil untuk membunuh seorang tokoh CNRT di Cassa.

Namun seperti juga di tempat lain di Timor-Leste, kekerasan dan penghancuran yang paling buruk terjadi setelah pemungutan suara, dan intensitasnya sangat tinggi setelah pengumuman hasil pemungutan suara pada 4 September. Pola ini hampir sama di setiap kecamatan. Tim gabungan TNI dan Mahidi bergerak secara sistematis dari desa ke desa, pertama memerintahkan penduduk untuk pergi, kemudian menjarah dan membakar semua rumah dan bangunan. Sebagian besar

penduduk diperintahkan pergi ke Kota Ainaro, dan dari sana diangkut dengan truk ke Timor Barat. Diperkirakan seluruhnya 13.000 orang yang dipindahkan secara paksa dengan cara ini.

Proses pengosongan dan perusakan disertai dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, terutama pembunuhan yang selektif atau dengan sasaran tertentu. Sebagian besar dari pelanggaran ini dilakukan oleh tim gabungan TNI dan milisi Mahidi. Dalam beberapa kasus, terutama di Kecamatan Hato Udo, anggota-anggota milisi ABLAI dari kabupaten tetangga, Manufahi, juga terlibat.

Dalam beberapa kasus, pembunuhan dilakukan ketika korban berada dalam tahanan TNI. Salah satu kasus semacam ini terjadi pada 6 September di Kampung Aituto Rina, Kecamatan Hatubuilico, di mana dua orang laki-laki dipukuli dan kemudian dibunuh ketika ditahan di markas TNI. Kedua orang itu berada dalam kelompok besar yang ditangkap prajurit TNI dan milisi pada 5 September, lalu ditahan di pos TNI terdekat. Keesokan paginya, para pendukung kemerdekaan dipisahkan dari yang lain sebelum dipukuli dengan berat dan dibunuh.

Seperti dalam kasus di atas, mereka yang dijadikan sasaran umumnya adalah orang-orang yang diketahui sebagai pendukung kemerdekaan, tetapi korban juga termasuk anggota keluarga mereka. Pada 10 September misalnya, seorang anak perempuan berusia dua tahun ditembak di kepala dan mati di rumahnya di kampung Sebagalau, oleh milisi yang berusaha membunuh ayahnya.

Kasus kekerasan terburuk di kabupaten ini adalah pembantaian di Desa Maununu pada 23 September. Mahidi dan TNI telah meninggalkan Ainaro pada 21 September, tetapi dua hari kemudian satu kelompok yang terdiri atas enam puluh orang bersenjata kembali ke Maununu. Dalam operasi yang dikoordinasikan dengan seksama dan dilaksanakan dengan cara militer, orang-orang bersenjata itu—yang mungkin saja termasuk prajurit TNI—membunuh sedikitnya 11 orang, dan berusaha membunuh lima orang lainnya, membakar sebanyak 165 bangunan, dan memindahkan dengan paksa sekitar 75 orang penduduk desa.

Baucau (Kodim 1628)

- Dandim: Letnan Kolonel Hisar Richard Hutajulu
- Bupati: Virgílio Marçal
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Sodak C. Marpaung
- Milisi: Saka, Sera, Forum Komunikasi Partisan (FKP)
- Jumlah yang dibunuh: 43 orang

Kabupaten Baucau, tempat kota terbesar kedua Timor-Leste, menderita kekerasan dan penghancuran yang parah pada 1999.* Sedikitnya 43 orang dibunuh selama

* Kecuali disebut lain, penjelasan ini berdasar pada: UNTAET, DHRO-Baucau, "Baucau 1999 Report" [tanpa tanggal].

1999 dan setengah dari jumlah tersebut dibunuh dalam masa setelah pemungutan suara. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, terjadi penghancuran fisik yang luas sesudah pemungutan suara, dan diperkirakan 5.000 orang dipaksa meninggalkan rumah mereka. Meskipun demikian, mengingat ukuran dan arti penting politik kabupaten ini, kekerasan di Baucau relatif terbatas.

Sebagian besar dari orang yang dibunuh adalah pendukung kemerdekaan, sementara lima orang adalah prajurit TNI atau pendukung otonomi. Pelaku utama kekerasan adalah kelompok milisi setempat, Saka, dan berbagai unit TNI termasuk Rajawali dan Batalion Infanteri 745. Kelompok-kelompok milisi yang lain, yaitu Sera dan Forum Komunikasi Partisan (FKP) juga berperan.

Milisi dan pihak berwenang

Kelompok milisi utama di Kabupaten Baucau adalah Saka (alias Tim Saka dan Tim Pusaka). Sebagian besar anggotanya memiliki senjata, peralatan komunikasi yang canggih, dan peralatan militer lainnya. Awalnya dibentuk pada saat dilancarkannya 'Operasi Kikis' oleh tentara Indonesia pada 1983, Saka telah lama memiliki hubungan yang kuat dengan TNI. Seorang bintang di Kodim Baucau, Sersan António Monis, bertanggung jawab langsung atas hubungan dan operasi Saka.

Komandan Saka, Joanico Cesario Belo, adalah seorang bintang Kopassus. Sebagai 'murid' dari perwira Kopassus yang terkenal dan menantu Soeharto, Prabowo Subianto, Belo membawa kartu nama dengan lambang Kopassus yang menyebut dirinya sebagai 'Komandan Kompi Khusus Pusaka' (Dan Ki Sus Pusaka).^{*} Ia menjadi komandan Saka sejak 1996 dan juga komandan seluruh milisi untuk wilayah timur (PPI, Sektor A), yang membawahi Makikit dan 59/75 Junior di Viqueque, Tim Alfa di Lautém, Moruk di Manatuto, dan Saka maupun Sera (Tim Sera) di Baucau.

Walau merupakan milisi yang paling aktif dan paling besar di Baucau, dan bertanggung jawab atas banyak pembunuhan dan tindak kekerasan lainnya, Saka pada umumnya kurang agresif dibandingkan kelompok milisi lain seperti BMP di Liquiçá dan Aitarak di Dili. Agaknya salah satu sebabnya adalah rendahnya dukungan dari Bupati, Virgílio Marçal (seorang asli Baucau yang cukup dihormati di kabupaten ini), dan dari Dandim Letnan Kolonel Richard Hutajulu.

Resminya, para pejabat ini mendukung Saka. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, dana mengalir ke kelompok ini dari kantor Bupati dan melalui Kodim. Walaupun demikian, Bupati dan Dandim mengungkapkan kepada UNAMET kekhawatiran mereka mengenai milisi, dan keinginan mereka untuk menjamin Konsultasi Rakyat yang damai. Sikap mereka mungkin dipengaruhi oleh pandangan Uskup Baucau, Basilio do Nascimento, seorang tokoh yang berpengaruh dan sangat dihormati di Baucau, dan di seluruh Timor-Leste.

Juga ada sikap mendua di dalam Saka sendiri. Beberapa anggota Saka tampaknya bersimpati pada kemerdekaan, dan diam-diam membantu Falintil dengan

.....
^{*} Satu lembar kartu nama Cesario dimiliki oleh penulis.

mengirim uang dan makanan yang mereka terima sebagai milisi. Bahkan Komandan Saka, Joanico Cesario Belo, tampak kurang yakin. Dalam periode sebelum pemungutan suara, pernyataan-pernyataannya di depan umum jarang segarang Eurico Guterres, Cancio Carvalho, dan pemimpin-pemimpin milisi yang lain. Dalam periode pasca-pemungutan suara, ia dilaporkan membantu banyak orang prokemerdekaan meninggalkan Dili menuju Baucau, mungkin menyelamatkan banyak nyawa.

Kelompok milisi kedua di Baucau adalah Tim Sera. Dipimpin oleh Agostino Freitas Boavida (alias Sera Malik), Tim Sera juga dibentuk dalam dasawarsa 1980-an dan memiliki hubungan kuat dengan TNI. Namun kelompok ini jauh lebih kecil dan kurang aktif dibanding Saka.

Kelompok milisi terakhir di Baucau, yaitu Forum Komunikasi Partisan (FKP), baru dibentuk sekitar Juli-Agustus 1999. Nama kelompok itu mengingatkan pada kelompok milisi pertama yang dibentuk TNI pada 1975-1976, yang disebut 'Partisan'. Beberapa anggota FKP disebut-sebut sebagai anggota kelompok yang lama. FKP dibentuk atas inisiatif Kepala Staf Kodim Baucau, Kapten Karel Pola, walaupun ada usaha-usaha dari pihak berwenang setempat dan pejabat UNAMET untuk mencegahnya. Situasi saat pembentukan milisi ini dengan jelas menunjukkan bahwa FKP merupakan proyek TNI yang ditujukan untuk menambah atau menggantikan kelompok milisi yang dianggap tidak cukup aktif.

Kontroversi mengenai pembentukan FKP—seperti yang dilaporkan oleh UNAMET pada 1999—menjelaskan sebab-sebab lebih lanjut mengapa tingkat kekerasan di Kabupaten Baucau relatif rendah. Kontroversi itu menegaskan, misalnya, bahwa Bupati Virgílio Marçal dan Dandim Letnan Kolonel Richard Hutajulu kurang mendukung kekerasan milisi dibanding rekan-rekan mereka di kabupaten lain. Kontroversi itu juga menegaskan ketidaksetujuan kuat Uskup terhadap dukungan TNI kepada milisi, dan keinginannya untuk bertindak mendesak pihak berwenang Indonesia agar membatasi kegiatan milisi.

Ketiga orang ini mengungkapkan kekhawatiran mereka kepada UNAMET bahwa usaha-usaha Kapten Pola akan menimbulkan kekerasan, dan mereka mendukung usaha untuk membuatnya ditarik dari Kabupaten Baucau. Semua pihak mengungkapkan kelegaan dan kepuasan pada pertengahan Juli ketika menerima berita bahwa Pola telah dipindahkan. Kemudian, ketika ia muncul kembali di Kabupaten Baucau pada 2 Agustus, Uskup mengatakan bahwa orang itu pasti mendapat dukungan dari satu atau lebih jenderal di Jakarta. Segera setelah Kapten Pola kembali, usaha-usaha penggalangan FKP kembali dilanjutkan, dan pada minggu kedua Agustus satuan-satuan milisi yang baru sudah ada di semua kecamatan. Dipimpin oleh José Manuel dos Reis (alias José Bife), FKP merupakan gabungan yang terdiri atas mantan Partisan, pegawai negeri sipil, dan mantan anggota milisi Saka dan Sera. Bersama dengan Saka dan TNI, mereka adalah penanggungjawab utama pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa sesudah pemungutan suara.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Seperti di banyak kabupaten lain, kekerasan paling serius di Baucau terjadi dalam periode pra-UNAMET dan sesudah pemungutan suara. Hampir semua pembunuhan pada 1999 terjadi antara Januari dan Mei, atau September 1999. Periode UNAMET ditandai dengan terjadinya intimidasi sistematis, termasuk ancaman terbuka akan adanya kekerasan, pemukulan, dan sebagainya, tetapi tampaknya tidak ada pembunuhan.

Banyak pelanggaran berat hak asasi manusia dalam periode pra-UNAMET, termasuk sejumlah pembunuhan, dilakukan oleh prajurit TNI dan Kopassus. Beberapa pembunuhan ini dilakukan sebagai tindakan pembalasan terhadap serangan Falintil atau Klandestin. Salah satu kasus semacam itu terjadi di wilayah Uaibeana dan Burburaca, pada 17 Maret 1999. Rupanya sebagai pembalasan atas pembunuhan terhadap seorang prajurit TNI pada bulan yang sama, lima orang pemuda ditahan dan dibunuh oleh TNI. Tiga dari lima korban itu kemudian ditemukan dalam sebuah kuburan yang dangkal di Triloka, dekat bandar udara Baucau. Sedang tubuh dua korban lainnya sampai awal 2003 masih belum ditemukan.

Kabupaten Baucau tenang pada hari pemungutan suara dan beberapa hari pertama pada September. Namun pada 3 September, milisi mulai muncul di jalan-jalan kota Baucau, sebagian dari mereka membawa dan menembakkan senjata otomatis. Pada malam 4, 5, dan 6 September sejumlah orang mengendarai sepeda motor mengelilingi kota dan menembakkan senapan-senapan mereka ke udara. Sementara sebagian lainnya memutar atau melintasi rumah-rumah UNAMET dan Civpol, melemparkan batu-batu, menghancurkan jendela-jendela mobil, dan menembakkan senjata.

Pada 7 September, kantor UNAMET di kota Baucau diserang. Serangan itu berlangsung selama sekitar satu jam. Selama itu pula rentetan tembakan senjataapi memasuki bangunan dengan ketinggian sebatas dada. Para Perwira Penghubung Militer (MLO) di luar melaporkan bahwa tembakan-tembakan itu dilakukan oleh Polisi Indonesia, kemungkinan Brimob. Sekitar dua jam setelah serangan dimulai, satu unit TNI muncul di tempat kejadian. Beberapa waktu kemudian UNAMET diungsikan ke Dili dengan helikopter.

Pada saat itu kekerasan paling buruk mulai terjadi, dan ini terus berlanjut sampai akhir September. Selama tiga minggu kemudian, enam orang dibunuh di kecamatan Baucau; lima di Venilale; empat di Laga, tiga di Quelicai, dua di Vemasse, dan seorang di Baguia. Sebagian pembunuhan ini dilakukan oleh pasukan TNI, termasuk beberapa yang dilakukan oleh Batalion Infanteri 745 ketika melintasi Baucau dalam perjalanan dari Los Palos ke Dili akhir September. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)

Selain pembunuhan terhadap 21 orang ini, satuan-satuan TNI dan milisi melakukan kekerasan di sebagian besar wilayah kabupaten ini, pembakaran atau perusakan rumah-rumah, bangunan-bangunan pemerintah, binatang ternak, dan persediaan pangan. Beberapa wilayah menderita kerusakan relatif kecil, termasuk Baucau Kota

dan kecamatan Venilale. Wilayah lain mengalami kerusakan berat, terutama di Kecamatan Quelicai, pusat kegiatan milisi, dan Laga.

Di Quelicai, pada 7 September, anggota milisi Saka gagal menangkap sejumlah pemimpin CNRT. Keesokan harinya, 8 September, anggota milisi dan prajurit TNI bersama-sama membakar habis kantor CNRT dan semua rumah serta bangunan yang ada di sepanjang jalan utama. Pada 9 September, prajurit TNI di Laga bersama milisi Saka dan Sera memaksa penduduk berkumpul di markas TNI untuk diangkut dengan perahu menuju Timor Barat.

Selama September, setidaknya 5.000 orang, dan mungkin lebih banyak lagi, meninggalkan rumah mereka baik karena intimidasi langsung oleh pasukan milisi dan TNI, atau karena ketakutan yang umum akan terjadinya kekerasan. Pasukan Interfet tiba di Baucau akhir September, dan kekerasan berhenti segera sesudahnya.

Bobonaro (Kodim 1636)

- Dandim: Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian
- Bupati: Guilherme dos Santos
- Kapolres: Mayor (Pol) Drs. Budi Susilo
- Milisi: Halilintar, Dadurus Merah Putih, Firmi Merah Putih, Saka Loromunu, ARMUI Merah Putih, Guntur Merah Putih, Hametin Merah Putih, Harimau Merah Putih, Kaer Metin Merah Putih.
- Jumlah yang dibunuh: 229 orang

Kabupaten Bobonaro adalah salah satu pusat utama kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pro-otonomi pada 1999.* Setidaknya 229 orang dan mungkin sebanyak 300 orang dibunuh selama tahun itu. Banyak lainnya mengalami pemukulan, penyiksaan, pemindahan paksa, dan penghancuran harta benda. Diperkirakan 8.612 rumah dibakar, dan lebih daripada 4.382 lainnya dirusak hingga tidak bisa ditempati. Kejahatan berbasis gender, termasuk pemerkosaan dan perbudakan seksual, juga umum dilaporkan.

Kebanyakan korban adalah pendukung kemerdekaan, walaupun sekitar 20 pendukung pro-otonomi atau prajurit TNI termasuk di antara yang mati. Para pelaku kekerasan umumnya adalah anggota dari salah satu kelompok milisi yang beroperasi di kabupaten ini, tetapi juga prajurit TNI dan Polri. Kelompok-kelompok ini hampir selalu dipimpin atau diarahkan oleh anggota unit-unit intelijen TNI.

.....*

* Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini berdasar pada: UNTAET, DHRO-Bobonaro, "Bobonaro District Report 1999," September 2002; Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Lt. Col. Burhanuddin Siagian et al., 3 Februari 2003; dan General Prosecutor of Democratic Republic of East Timor, Indictment against Lt. Sutrisno et al., Juni 2002.

Milisi dan pihak berwenang

Bobonaro memiliki jaringan kelompok milisi dan paramiliter yang sangat hebat pada 1999.⁷ Setidaknya ada sembilan kelompok milisi pada akhir 1998 dan awal 1999, dan semuanya mendapat dukungan penuh dari pihak berwenang sipil dan militer.

Kelompok utama milisi adalah kesatuan paramiliter Halilintar, yang resminya dipimpin oleh panglima tertinggi milisi, João Tavares. Halilintar didirikan saat invasi Indonesia pada 1975 tetapi kemudian tertidur selama beberapa tahun dan baru dibangkitkan kembali pertengahan dasawarsa 1990-an. Walaupun total jumlah anggota kesatuan milisi ini pada 1999 hanya sekitar 120 orang, namun milisi ini beroperasi di seluruh kabupaten dan di luarnya, dan mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan TNI.⁸ Sebagai sebuah kesatuan elite, anggotanya menerima Rp300.000,00 per bulan, berikut seragam dan senjataapi. Mereka juga dipercaya untuk bergabung dengan SGI dan kesatuan-kesatuan reguler TNI dalam operasi tempur dan kontrapemberontakan.

Di bawah Halilintar ada beberapa kesatuan milisi dengan ukuran yang beragam. Sebagian besar dari mereka dibentuk awal 1999. Setidaknya satu kelompok didirikan di keenam kecamatan yang ada di kabupaten Bobonaro, dan beberapa kecamatan memiliki dua kelompok. Di antara yang paling aktif dan paling sering terlibat dalam tindak kekerasan yang serius adalah DMP (Dadurus Merah Putih) yang berpusat di Kecamatan Maliana. Dipimpin oleh bintang aktif TNI, Sersan Domingos dos Santos, kelompok ini berperan penting dalam penyerangan terhadap markas UNAMET di Maliana akhir Juni 1999, pembunuhan terhadap dua orang staf UNAMET pada 2 September, dan pembunuhan massal di kantor polisi Maliana 8 September.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, sebagian besar kekerasan milisi di Bobonaro dikoordinasi oleh dan dilaksanakan dengan persetujuan pihak berwenang militer dan sipil. Pejabat utama di Bobonaro adalah: Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; Kepala Seksi Intelijen Kodim, Letnan Sutrisno; dan Bupati Guilherme dos Santos. Di samping itu, kepemimpinan setiap kelompok milisi di tingkat kecamatan dipengaruhi, dan dalam beberapa kasus didominasi oleh, para bintang TNI aktif dan pensiunan.⁹ Orang-orang ini dalam kerjanya dibantu oleh sejumlah tokoh pro-otonomi setempat, termasuk komandan milisi João Tavares; wakil ketua FPKD, Natalino Monteiro; pemimpin BRTT, Francisco Soares; dan Ketua DPRD tingkat II Kabupaten Bobonaro, Jorge Tavares.

.....
⁷ Peter Bartu, yang pernah bekerja sebagai Pejabat Urusan Politik UNAMET di Bobonaro, menulis bahwa "struktur milisi di kabupaten Bobonaro adalah yang paling berkembang dalam arti organisasi dan pendanaan." Bartu, "The Militia, the Military, and the People of Bobonaro," dalam Tanter, Selden dan Shalom (penyunting), *Bitter Flowers, Sweet Flowers: East Timor, Indonesia, and the World Community*, Rowman & Littlefield, 2001, halaman 78.

⁸ Tentang hubungan Halilintar dengan TNI, Bartu menulis: "Tentunya milisi ini memiliki hubungan yang dekat dengan Satgas Intel (Satuan Tugas Intelijen, SGI), unit intelijen Kopassus yang mengarahkan pembentukannya kembali, memperhatikan kebutuhan logistiknya, dan menyediakan pengawal bagi Tavares, serta melatih kader seniornya." Bartu, "The Militia," halaman 80.

⁹ Bartu menulis: "TNI sangat terlibat dalam semua aspek kegiatan milisi di Kabupaten Bobonaro yang

Tabel 4: Kelompok milisi pro-Indonesia di Kabupaten Bobonaro

| Nama milisi | Kecamatan |
|------------------------|-----------------|
| Halilintar | Maliana, Atabae |
| Dadurus Merah Putih | Maliana |
| Firmi | Balibó |
| Saka Loromunu | |
| ARMUI Merah Putih | Atabae |
| Guntur Merah Putih | Cailaco |
| Hametin Merah Putih | Bobonaro |
| Harimau Merah Putih | |
| Kaer Metin Merah Putih | Lolotoe |

Dukungan resmi bagi milisi bentuknya bermacam-macam, termasuk penggalangan, pelatihan, penyediaan senjata dan dukungan logistik, serta pendanaan. Bukti tentang pendanaan resmi kepada milisi dan kelompok pro-otonomi lainnya sangat banyak di Bobonaro. Dokumen-dokumen yang dibocorkan dari pemerintahan kabupaten selama 1999 mengungkap, misalnya, bahwa Bupati meminta dana sekitar Rp3 miliar dari Gubernur untuk kegiatan ‘sosialisasi’ dan sekitar 35% dari jumlah tersebut disediakan untuk kelompok-kelompok milisi dengan berbagai samaran. Dokumen-dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa, ketika keuangan mulai menipis pada Juli 1999, Bupati meminta persetujuan dari Gubernur untuk mengalihkan dana dari mata anggaran lain—termasuk pendidikan dan pekerjaan umum—untuk menutupi biaya kampanye ‘sosialisasi’. Dokumen-dokumen ini dianalisis secara terperinci dalam Bab 8 laporan ini.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, pihak Polri menyatakan tidak berdaya di hadapan dukungan pemerintah sipil dan militer yang kuat kepada milisi. Salah seorang perwira senior tercatat menggambarkan masalahnya kepada UNAMET sebagai berikut: “Jika kami menahan seorang milisi, Dili dan Jakarta akan menyuruh kami untuk melepaskannya. Jika kami menembak salah satu dari mereka, maka kami tahu mereka akan menyerang kantor kami di kabupaten.” Apakah karena ketidakberdayaan mereka ataukah karena dukungan aktif mereka pada pihak pro-otonomi, Polri menjalankan peran pembantu melalui kegagalannya menghentikan atau mencegah tindak kekerasan, atau kegagalannya mengambil tindakan terhadap mereka yang diketahui melakukan pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

bertujuan memenangkan pilihan pro-otonomi dalam Konsultasi Rakyat. Pada tingkat yang lebih tinggi para pemimpin milisi kecamatan dikoordinasikan dan diarahkan oleh Dandim dan kepala intelijennya dari Kodim dan dari kantor bupati. Pada tingkat kecamatan milisi dipimpin secara langsung oleh personel TNI atau secara langsung didukung oleh staf Koramil. Pada tingkat desa milisi bekerja saling membantu dengan pos-pos militer dan Babinsa.” Bartu, “The Militia,” halaman 88.

* Dikutip dalam Bartu, “The Militia,” halaman 75.

Peristiwa utama hak asasi manusia

Sebagaimana yang terjadi di beberapa kabupaten lain, kekerasan terhadap orang-orang dan desa-desa yang mendukung kemerdekaan dimulai bahkan sebelum pernyataan Presiden Habibie akhir Januari 1999. Walau begitu, baru pada Maret 1999 kekerasan anti-kemerdekaan menjadi sistematis dan luas di Bobonaro. Dalam bulan itu kesatuan-kesatuan TNI dan SGI melancarkan penggerebekan terhadap pertemuan-pertemuan yang diduga diadakan CNRT, dan terhadap desa-desa yang dianggap bersimpati pada Falintil. Sejumlah orang dibunuh dalam serangan-serangan tersebut.

Misalnya, pada 19 Maret prajurit TNI dan anggota milisi Halilintar yang bersenjata lengkap dan memakai topeng “Ninja” menggerebek apa yang mereka kira pertemuan klandestin prokemerdekaan di Desa Moleana, Kecamatan Maliana. Dalam penyerangan itu empat orang terbunuh, termasuk dua anak-anak.[†] Beberapa hari kemudian, pada 22 Maret, beberapa prajurit memukul seorang pemimpin CNRT yang terkenal di hadapan umum sampai babak belur lalu menyeretnya melalui jalan-jalan kota menuju markas TNI setempat. Korban yang bernama José Andrade da Cruz itu akhirnya dibebaskan. Tetapi pemukulan terhadap dirinya di hadapan umum dan serangan terhadap pertemuan CNRT telah menciptakan ketakutan yang menyebar luas di kalangan pendukung kemerdekaan. Akibatnya, ratusan orang meninggalkan rumah mereka dan pergi ke Dili atau gereja-gereja setempat yang relatif aman. Pengungsian paksa penduduk dan persoalan penduduk yang terusir dari tempat tinggal mereka yang terus berlanjut selama tahun itu, telah dimulai.

Keadaan terus memburuk pada April dengan diresmikannya kelompok-kelompok milisi baru dan penggalangan mereka dalam konteks kampanye ‘sosialisasi’ yang diselenggarakan pemerintah. Hanya beberapa hari setelah peluncuran resmi kampanye itu, para prajurit TNI yang beroperasi bersama milisi Halilintar dan kesatuan-kesatuan milisi lainnya memulai salah satu operasi pembunuhan di luar hukum yang paling terkonsentrasi dalam beberapa tahun ini. Operasi ini dimulai dengan eksekusi terhadap tujuh orang dalam satu hari di Kecamatan Cailaco. Para saksi mengatakan bahwa eksekusi tersebut diperintahkan oleh Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, dan Kepala Seksi Intelijen Kodim, Letnan Sutrisno. Selama dua minggu selanjutnya sebanyak 20 orang dibunuh di Kecamatan Cailaco. Operasi itu kemudian diikuti dengan penyeragaman dan pembunuhan terhadap kepala bagian keuangan kabupaten dan tokoh pro-otonomi, Manuel Gama, pada 12 April.[†] (Lihat studi kasus: Pembunuhan di Cailaco).

Rangkaian pembunuhan itu memicu gelombang baru pengungsian dalam negeri di Cailaco, karena penduduk desa menyelamatkan diri ke gunung-gunung, atau

* UNTAET, DHRO-Bobonaro, “Background Information Concerning the 19 March Attack,” 20 Maret 2001.

† Tidak jelas siapa yang membunuh Manuel Gama. Beberapa pengamat menyimpulkan bahwa pembunuhan itu mungkin saja dilakukan oleh satu unit Falintil. Di lain pihak, Bartu mengatakan: “Bobot bukti menunjukkan bahwa Gama dibunuh oleh tim gabungan Halilintar/SGI/TNI, sebagai dalih untuk penyerangan di seluruh kabupaten terhadap para pendukung kemerdekaan.” Bartu, “The Militia,” halaman 82.

ke kota dan desa di sekitarnya. Lebih daripada 4.000 orang pindah dari empat desa ke kamp-kamp kasar di ibukota kecamatan, di mana mereka ditempatkan di bawah “perlindungan” kelompok-kelompok milisi. Milisi mengatakan kepada para pengungsi bahwa mereka tidak akan bisa kembali ke rumah sampai sesudah pemungutan suara selesai.’ Di tempat lainnya di kabupaten ini, rumah dua orang pemimpin terkemuka CNRT dibakar dan dijarah, dan kedua orang itu terpaksa mengungsi ke kantor Polres Maliana.

Pada Mei, fokus operasi TNI dan milisi beralih ke Kecamatan Lolotoe. Seperti Cailaco, daerah ini juga dianggap sebagai basis prokemerdekaan. Selama beberapa hari pada akhir Mei, pasukan TNI bersama anggota milisi Kaer Metin Merah Putih (KMP) melancarkan operasi pembersihan. Ratusan orang yang dicurigai pendukung kemerdekaan dan pemimpin CNRT diringkus. Mereka ditahan dan banyak di antaranya dipukuli hingga babak belur, beberapa orang disiksa atau dipotong anggota tubuhnya oleh para penangkapnya dengan tujuan memaksa mereka mengakui hubungan mereka dengan Falintil. Beberapa kejadian pemerkosaan dan perbudakan seksual oleh TNI dan anggota milisi juga dilaporkan dalam konteks penyerangan-penyerangan ini. (Lihat studi kasus: Penahanan sewenang-wenang dan pemerkosaan di Lolotoe).

Pada 1 Juni, dalam suatu arak-arakan besar pro-otonomi di Maliana, para pemimpin CNRT yang berada dalam penahanan perlindungan sejak April dipaksa menandatangani deklarasi yang secara resmi “membubarkan” CNRT. Deklarasi itu kemudian dikutip oleh pihak pro-otonomi untuk membuktikan bahwa CNRT sudah menyerahkan haknya berkampanye untuk Konsultasi Rakyat. Berhadapan dengan taktik semacam itu, dan ancaman kekerasan, CNRT memilih tidak berkampanye di depan umum.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, tingkat pembunuhan menurun pada Juni seiring dengan penempatan UNAMET dan pengamat internasional. Namun, kehadiran UNAMET tidak mengakhiri kegiatan-kegiatan lain kelompok pro-otonomi atau penjarahan oleh milisi. Bahkan selama periode ini UNAMET dan staf lokalnya menjadi sasaran kekerasan milisi. Pada 29 Juni, misalnya, satu gerombolan milisi menyerang kantor UNAMET yang baru dibuka di Maliana. Mereka mengakibatkan beberapa orang luka berat dan menimbulkan kerusakan luas barang-barang. Satu penyelidikan UNAMET mengenai kejadian ini menyimpulkan bahwa penyerangan tersebut diorganisasi oleh seorang perwira senior TNI di kabupaten, dan bahwa tindakan Polri terhadap serangan tersebut samasekali tidak memadai. (Lihat studi kasus: Serangan terhadap UNAMET Maliana.)

Protes internasional mengenai serangan tersebut, dan juga mengenai serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan di Liquiçá beberapa hari kemudian, membuat keadaan keamanan membaik untuk sementara waktu. Namun tak lama kemudian milisi bersenjata kembali bebas berkeliaran di seluruh kabupaten, mengancam para pendukung kemerdekaan dan staf UNAMET. Lebih buruk

.....
* Bartu, “The Militia,” halaman 83.

lagi, amat jelas bahwa mereka mendapat dukungan penuh tidak hanya dari Dandim, Letnan Kolonel Siagian, tetapi juga dari Bupati, Guilherme dos Santos. Menjelang pemungutan suara, kedua orang itu menunjukkan sikap semakin bermusuhan terhadap UNAMET. Pada pertengahan Juli, Guilherme dos Santos mengancam membunuh personel UNAMET dari Australia,^{*} dan setidaknya pada dua kesempatan Letnan Kolonel Siagian secara langsung mengatakan kepada para anggota staf lokal UNAMET bahwa mereka akan dibunuh setelah Konsultasi Rakyat.[†]

Ketegangan ini mencapai puncaknya menjelang akhir masa pendaftaran awal Agustus. Dengan menekankan bahwa proses pendaftaran tidak adil pada pihak pro-tonomi, Bupati mengancam akan menahan staf UNAMET jika satu saja penduduk kabupaten ini tidak dapat mendaftar. Dalam tanggapannya kepada wartawan pada masa yang sama, Guilherme dos Santos juga kelihatan mengancam staf UNAMET dengan tindak kekerasan. Krisis yang ditimbulkannya dapat dicegah melalui pertemuan langsung antara Bupati dan Kepala Misi UNAMET, Ian Martin, pada 3 Agustus, dan melalui perpanjangan batas waktu pendaftaran.

Namun, permusuhan resmi terhadap UNAMET dan ancaman terbuka terhadap pendukung kemerdekaan terus berlanjut dan berkembang menjadi kekerasan serius pada hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara. Pada 18 Agustus, seorang aktivis muda prokemerdekaan diseret dengan sebuah bus di kota Maliana oleh milisi DMP, dan dibacok hingga mati. Pada 27 Agustus, milisi dan anggota Polri menyerang penduduk di Desa Memo, Kecamatan Maliana, membunuh sedikitnya dua orang dan menghancurkan sekitar 20 buah rumah.

Akhir Agustus, Kantor Urusan Politik UNAMET melapor kepada markas besar PBB di New York bahwa kecuali jika ada perubahan keadaan yang dramatis atau penempatan pasukan penjaga perdamaian, akan semakin banyak kekerasan besar-besaran di Kabupaten Bobonaro setelah pemungutan suara.[‡] Penduduk Bobonaro umumnya berpandangan sama, dan banyak dari mereka melarikan diri ke gunung-gunung atau tempat-tempat persembunyian yang lain, beberapa jam setelah memberikan suara.

Pada 2 September, kekerasan yang sudah luas diperkirakan pun dimulai, dan ketika UNAMET mengevakuasi semua staf internasional pada 3 September, kekerasan itu semakin meningkat. Dengan dukungan dan koordinasi pasukan-pasukan TNI dan Polri, milisi memulai operasi kekerasan yang sistematis di kota-kota dan desa-desa di seluruh kabupaten ini. Ribuan rumah dijarah dan dibakar, dan puluhan ribu penduduk diangkut paksa dengan truk ke Timor Barat.

^{*} "Mayor threatens to kill Aussies," *Sydney Morning Herald*, 17 Juli 1999.

[†] Bartu, "The Militia," halaman 88.

[‡] UNAMET, Political Affairs Office, "Weekly Sitrep #7 (16 August – 22 August)." Dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

Keseluruhan jumlah orang yang dibunuh di kabupaten ini pada September 1999 diyakini sedikitnya mencapai 111 orang, dan beberapa perkiraan menyebutkan jumlahnya mencapai 200 orang. Namun karena besarnya kemungkinan bahwa sebanyak 40 mayat dihanyutkan ke laut selama periode ini, jumlah orang yang meninggal, atau tempat peristirahatan terakhir mereka, tidak akan pernah diketahui.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, para pemimpin dan pendukung kemerdekaan secara khusus menjadi sasaran dalam kekerasan setelah pemungutan suara di Bobonaro. Demikian juga dengan staf lokal UNAMET. Di antara korban pertama setelah 30 Agustus adalah dua staf UNAMET di Maliana, Ruben B. Soares dan Domingos Pereira, yang dibunuh di depan rumah mereka pada 2 September. Pembunuh mereka antara lain adalah Kepala Seksi Intelijen Kodim Bobonaro, Letnan Sutrisno dan seorang perwira intelijen TNI, Asiz Fontes, yang merangkap sebagai komandan milisi DMP di kota Maliana.^{*} Di bawah pengamatan Letnan Sutrisno dan Fontes, beberapa orang milisi menyeret Ruben B. Soares dari rumahnya sebelum menikamnya berulang-kali dan menghantam kepalanya dengan sebuah batu. Pada waktu yang hampir bersamaan perwira intelijen TNI, Asiz Fontes, menembak Domingos Pereira sementara milisi menikamnya berulang kali. Kedua orang itu meninggal karena luka-lukanya. Letnan Sutrisno dan Asiz Fontes didakwa, bersama dengan delapan orang lainnya, atas pertanggungjawaban pidana individual untuk pembunuhan itu.[†]

Selain pembunuhan terencana ini dan belasan lainnya terhadap individu atau kelompok kecil orang, di Bobonaro juga terjadi sejumlah pembantaian massal pada September 1999. Pembantaian paling mengerikan dan juga paling mengungkap hubungan antara milisi dan pihak berwenang militer dan Polri adalah pembantaian terhadap pengungsi di kantor Polres Maliana, tempat pengungsian sekitar 6.000 orang beberapa hari setelah pemungutan suara.

Pada pukul 17.30 tanggal 8 September, saat polisi berdiri menjaga, sebuah tim gabungan milisi dan prajurit TNI yang memakai topeng “Ninja” menyerang kantor polisi dan membunuh 14 orang pengungsi dengan parang dan pisau. Mereka yang meninggal mencakup sejumlah tokoh terkemuka CNRT yang jelas dijadikan sasaran eksekusi. Tiga belas orang yang berhasil meloloskan diri dari pembantaian di kantor Polri itu dilacak dan dieksekusi oleh pasukan TNI dan milisi pada hari berikutnya di Desa Mulau. Pada 10 September, dua orang anggota polisi dibunuh karena dianggap berpihak pada kubu prokemerdekaan, dan jasad mereka dibuang ke dalam sumur di kantor Polres. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Kantor Polisi Maliana).

Para pelaku kunci kekerasan setelah pemungutan suara di Bobonaro adalah anggota berbagai kelompok milisi di kabupaten. Namun, pada tingkat yang lebih tinggi daripada periode sebelum pemungutan suara, pada September milisi mendapat dukungan aktif dari TNI dan persetujuan atau dukungan penuh dari Polri dan

* Lihat Bartu, “The Militia,” halaman 88.

† General Prosecutor of the Democratic Republic of East Timor, Indictment against Lt. Sutrisno et al., Juni 2002.

pejabat pemerintah sipil. Mereka yang mengoordinasi kekerasan di tingkat kabupaten adalah sejumlah tokoh terkenal: Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian yang konon sudah digantikan sebagai Dandim pada pertengahan Agustus; Letnan Sutrisno, Kepala Seksi Intelijen Kodim; Guilherme dos Santos, Bupati; dan João Tavares, panglima tertinggi seluruh pasukan milisi. Sampai awal 2003, tidak satu pun dari mereka ditahan atau diadili.

Covalima (Kodim 1635)

- Dandim: Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus;
Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto
- Bupati: Kolonel Herman Sedyono
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol) Gatot Subiaktoro
- Milisi: Laksaur, Mahidi
- Jumlah yang dibunuh: 190 orang

Kabupaten Covalima adalah tempat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang meluas baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara 1999.^{*} Setidaknya 190 orang, dan mungkin lebih banyak lagi, dibunuh selama 1999, sementara ribuan orang dipindahkan secara paksa. Banyak kasus pemukulan, penyiksaan, dan intimidasi dilaporkan terjadi selama 1999, sebagaimana juga beberapa kejadian kekerasan seksual.

Milisi dan pihak berwenang

Kelompok milisi utama di Covalima adalah Laksaur (alias Laksaur Merah Putih). Mahidi, kelompok milisi yang berbasis di Ainaro juga beroperasi di beberapa bagian Kabupaten Covalima, dan memiliki cabang di Kecamatan Zumalai. Setidaknya dalam satu kesempatan, pada akhir Juni 1999, anggota kelompok milisi yang berbasis di Dili, Aitarak, juga dilaporkan beroperasi di kabupaten ini.[†]

Laksaur dibentuk Januari 1999, dan diresmikan pertengahan April. Pada pertengahan 1999, Laksaur adalah salah satu kelompok milisi terbesar di Timor-Leste, dengan perkiraan kekuatan sekitar 600 hingga 1.000 orang. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, Laksaur tumbuh dari organisasi paramiliter lama, dan pemimpinnya pun berhubungan erat dengan pihak berwenang sipil dan militer. Covalima memiliki kelompok milisi 'Partisan' yang kuat pada 1975, dan selama beberapa tahun sesudahnya; dan keanggotaan lama ini menjadi penting

^{*} Kecuali dikemukakan lain, penjelasan ini berdasar atas UNTAET, DHRO-Covalima, "Covalima District: 1999 Report," Desember 2001; dan Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Col. Herman Sedyono et al., 7 April 2003, Dili.

[†] Empat truk berisi orang-orang milisi Aitarak, sebagian dari mereka bersenjata, muncul di kota Suai pada 28 Juni 1999. Menyusul penyelidikan UNAMET, Kepala Kepolisian Resor menegaskan bahwa milisi tersebut adalah Aitarak. Lihat UNAMET, Political Affairs Office-Covalima, "Report 7/99," 30 Juni 1999.

dalam rekrutmen milisi pada 1999. Kelompok ini secara resmi dipimpin oleh Olivio Mendonça Moruk, seorang mantan pegawai pemerintah kabupaten dan anggota FPDK.*

Sama halnya dengan milisi di kabupaten-kabupaten lain, Laksaur mendapatkan dana dari sumber-sumber pemerintah dan mendapatkan dukungan kuat dari banyak pejabat sipil dan militer di Covalima. Dana resmi untuk Laksaur datang dari Kantor Gubernur yang disalurkan melalui kantor Bupati. Dana lain dan pasokan beras disediakan dari gaji dan jatah yang tak digunakan oleh para pegawai pemerintah yang berorientasi prokemerdekaan dan pergi bersembunyi pada awal 1999. Lebih jauh, di beberapa kecamatan, gaji Laksaur dibayar oleh kelompok pro-otonomi, FPDK.†

Pendukung Laksaur yang paling bersemangat antara lain adalah Dandim Covalima, Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus. Ia memang sangat terlibat dengan Laksaur sehingga UNAMET membuat pengaduan eksplisit mengenai dia dengan akibat ia sebentar digantikan sebagai Dandim pada akhir Agustus 1999.‡ Penggantinya, Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto (alias Lilik Kushadiyanto) tidak berbeda jauh dalam sikapnya terhadap milisi. Pendukung kuat lain milisi Laksaur adalah Bupati Covalima, Kolonel Herman Sedyono, seorang Katolik dari Jawa Timur yang menempuh sebagian besar kariernya di Timor-Leste.§ Para pendukung kunci lainnya mencakup Danramil Suai, Letnan Sugito; Kepala Staf Kodim, Kapten Ahmad Syamsuddin; dan Kepala Kepolisian Resort, Letnan Kolonel (Pol) Gatot Subiaktoro.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Pelanggaran berat hak asasi manusia dilaporkan terjadi di Covalima sepanjang 1999, dengan puncaknya dalam periode sebelum UNAMET dan sesudah pemungutan suara. Kebanyakan korban dibunuh setelah 30 Agustus.

Pembunuhan pertama di Kabupaten Covalima terjadi pada 22 Januari 1999, dan beberapa pembunuhan lain menyusul minggu berikutnya. Sekitar akhir Januari

* Moruk dibunuh di Timor Barat, tidak lama setelah Jaksa Agung Indonesia mengeluarkan satu daftar tersangka pada 31 Agustus 2001. Ada spekulasi pada waktu itu bahwa ia dibunuh untuk mencegahnya bersaksi dalam pengadilan nantinya, dan mengungkap peran para pejabat TNI dan sipil. Sumber-sumber lain mengatakan bahwa ia dibunuh dalam suatu perselisihan pribadi.

† Perincian pendanaan FPDK untuk Laksaur dibahas dalam Bab 8 laporan ini.

‡ Di hadapan Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta pada Juni 2002, Panglima Kodam IX, Mayor Jenderal Adam Damiri bersaksi dengan mengatakan: "UNAMET lah yang membuat Jakarta mengganti komandan militer Suai Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus dengan alasan yang tidak jelas, sehingga saya menunjuk Liliek [Koeshadiyanto] untuk mengisi posnya." *Jakarta Post*, 20 Juni 2002. Ada beberapa ketidakpastian tentang tanggal penggantian dan penempatan kembali Letnan Kolonel Agus. Namun banyak sumber sepakat bahwa ia digantikan oleh Letnan Kolonel Koeshadiyanto dari 29 Agustus hingga 7 September 1999.

§ Satu sumber menyebutkan bahwa Herman Sedyono adalah seorang perwira karir Kopassus, tetapi tidak memberikan perincian. Lihat "Col. Herman Sedyono," *Masters of Terror*, <http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm>

setidaknya lima orang, semuanya diduga pendukung kemerdekaan atau keluarganya, telah dibunuh. Tiga di antaranya, termasuk seorang perempuan yang sedang hamil dan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, dibunuh dalam insiden 25 Januari di Desa Galitas, Zumalai.

Seorang saksimata pembunuhan di Galitas menyatakan kepada para penyidik bahwa belasan anggota milisi Mahidi bersenjata tiba di desa ini, menggunakan tiga mobil pada pukul 21.00, 25 Januari 1999. Sejumlah penduduk berusaha bersembunyi di hutan terdekat, tetapi milisi menemukan Olandino Pereira (60 tahun), anak perempuannya yang sedang hamil, Angelica de Jesus (18 tahun), dan anak laki-lakinya, Luis Pereira (15 tahun). Ketiga orang itu dilaporkan ditembak dan kemudian dipotong dengan parang. Menurut sebuah sumber, yang belum dikonfirmasi, para penyerang memotong kepala orang tua itu (atau sebagian dari kepalanya) dan membawanya potongan itu bersama mereka ke markas Mahidi di Cassa, Ainaro.

Pada April dan Mei, milisi Laksaur melancarkan serangan kekerasan dan teror besar lain terhadap penduduk desa yang dianggap mendukung kemerdekaan.^{*} Sesudah terjadinya gelombang serangan ini, yang mengakibatkan banyak pembunuhan, penduduk desa-desa yang dijadikan sasaran mulai melarikan diri ke kota Suai, di mana mereka berlindung di Gereja Ave Maria. Pada 12 April, milisi Laksaur secara terbuka mengancam anggota CNRT di kota Suai, yang membuat para pemimpin CNRT di sana menutup kantornya dan pergi bersembunyi.

Kedatangan UNAMET di kabupaten ini pada Juni 1999 membuat pelanggaran berat hak asasi manusia sangat berkurang. Hanya satu orang dilaporkan dibunuh antara 1 Juni dan 30 Agustus 1999, dan sebagian orang yang bersembunyi pada April pun bisa kembali ke rumah. Akan tetapi, milisi Laksaur tetap bebas berkeliaran di seluruh kabupaten, mengintimidasi dan memukuli orang-orang yang diduga maupun yang benar-benar pendukung kemerdekaan. Akibatnya sebagian besar pengungsi enggan kembali ke rumah mereka, sebagian tidak bisa mendaftar untuk referendum, dan CNRT praktis tidak bisa berkampanye.

Pada Agustus, beberapa ribu orang berkumpul di Gereja Suai, dan ini menjadi fokus permusuhan pro-otonomi di kabupaten itu. Pada 19 Agustus, Bupati Kolonel (Purn.) Herman Sedyono, menyatakan bahwa para pengungsi tidak akan diizinkan tinggal di dalam gereja, dan ia memerintahkan agar air maupun pasokan bahan makanan dihentikan. Walaupun ada protes kuat dari UNAMET dan delegasi anggota Kongres Amerika Serikat yang sedang berkunjung, dan janji dari Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim untuk membetulkan masalahnya, blokade tetap berjalan selama beberapa hari, sebelum akhirnya Bupati berubah pikiran. Tetapi kebencian resmi terhadap orang-orang yang berada di gereja tidak surut.

.....
^{*} Tentang perincian serangan pada April dan Mei 1999, lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, *Indictment against Col. Herman Sedyono et al.*, 7 April 2003, halaman 17-33.

Pada 29 Agustus, hari terakhir sebelum pemungutan suara, para pemimpin dan anggota kelompok pro-otonomi dan prokemerdekaan berkumpul bersama di kota Suai untuk sebuah misa rekonsiliasi, sebuah upacara umum, dan pengumuman deklarasi bersama. Sebagian yang hadir tampak memiliki harapan murni akan rekonsiliasi, tetapi itu tidak cukup untuk mencegah kekerasan besar-besaran di periode setelah pemungutan suara.^{*} Kenyataannya, seorang pemimpin milisi dari Suai, Rui Lopes, kemudian mengatakan kepada para wartawan bahwa pada hari yang sama, ia hadir dalam pertemuan dengan Bupati dan Dandim, dan dalam pertemuan itu dikeluarkan perintah untuk membakar habis Covalima, dan menggiring penduduk ke Timor Barat.[†]

Seperti di kebanyakan kabupaten lain, kekerasan semakin meningkat setelah pengumuman hasil referendum. Pada 4 dan 5 September, pembakaran dimulai—di desa-desa Debos, Tabaco, Leogore, dan Kampung Baru di Suai—dan sesudah itu menyebar ke seluruh kabupaten. Sebanyak 20.000 penduduk yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena kekerasan, dikumpulkan di tiga halaman sekolah dan di kompleks-kompleks militer dan kepolisian di kota Suai, sebelum diangkut melewati perbatasan ke Timor Barat. Pada 20 September, semua badan berwenang Indonesia termasuk Polri, juga melarikan diri ke Timor Barat. Dari saat itu hingga kedatangan pasukan INTERFET pada 6 Oktober, Kabupaten Covalima dijarah seluruhnya oleh milisi, yang sebagian dari mereka sudah pergi ke Timor Barat dan kemudian kembali.

Lebih daripada 170 orang diyakini telah dibunuh dalam masa setelah pemungutan suara. Empat orang dibunuh di Desa Matai pada 9 September; sedikitnya 14 orang dibunuh di Lactos dan dekat Raihun oleh tim gabungan TNI-milisi pada 12 September; dan tiga lainnya dibunuh di Kamenasa pada 24 dan 25 September 1999.[‡]

Namun satu insiden kekerasan paling buruk adalah pembantaian di gereja di Suai pada 6 September. Setidaknya 40 orang, tetapi kemungkinan sebanyak 200 orang, dibunuh ketika milisi Laksaur dan Mahidi, yang didukung oleh para prajurit TNI dan Brimob, menyerbu kompleks gereja. Dari 40 orang yang identitasnya telah dipastikan pada awal 2003, tiga di antaranya adalah pastor Katolik, sepuluh anak-anak (di bawah 18 tahun), dan sejumlah perempuan dewasa atau remaja perempuan. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Gereja Suai).

^{*} Jim Fox menulis: "Pada saat misa ketika umat saling memberikan 'salam damai', barisan depan gereja meledak dalam arus emosi yang tumpah ketika para anggota dari kedua faksi tersebut meninggalkan tempat duduk mereka dan saling berpelukan." James J. Fox, "Ceremonies of Reconciliation as Prelude to Violence in Suai, East Timor" [naskah tidak diterbitkan, tanpa tanggal].

[†] "Indonesia/East Timor: Forced Expulsions to West Timor and the Refugee Crisis," *Human Rights Watch*, Vol. 11, No. 7.

[‡] Untuk perincian tentang peristiwa ini dan kejahatan lain yang dilakukan dalam periode setelah pemungutan suara, lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, *Indictment against Herman Sedyono et al.*, 7 April 2003, Dili, halaman 35-37.

Dili (Kodim 1627)

- Dandim: Letnan Kolonel Endar Priyanto;
Letnan Kolonel Soedjarwo
- Bupati: Domingos Soares
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol) Drs. Hulman Gultom
- Milisi: Aitarak
- Jumlah yang dibunuh: 192 orang

Kabupaten Dili merupakan satu pusat utama kekerasan politik pada 1999.^{*} Sebanyak 192 orang dibunuh selama 1999. Para korban mencakup sedikitnya 13 orang yang dibunuh pada hari yang sama, 17 April; 15 orang yang dibunuh atau dihilangkan dalam serangan ke kantor Keuskupan Dili pada 5 September; dan seorang jurnalis Belanda yang dibunuh prajurit TNI pada 21 September. Banyak lainnya yang diancam, dipukuli, disiksa, atau terluka berat akibat upaya pembunuhan. Selain itu, diperkirakan 7.165 bangunan dibakar atau dihancurkan, sementara puluhan ribu orang dipaksa meninggalkan rumah ketika kekerasan meledak setelah pemungutan suara pada 30 Agustus.[†] Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia ini mencakup anggota TNI, Polri dan Brigade Mobil, serta milisi.

Milisi dan pihak berwenang

Kelompok milisi utama di Kabupaten Dili adalah Aitarak yang dipimpin oleh Eurico Guterres, yang juga menjadi wakil panglima seluruh pasukan milisi, PPI. Dengan markas di ibukota Dili, dan hubungan dengan semua pejabat penting provinsi dan kabupaten, Aitarak dianggap sebagai kelompok milisi yang paling kuat dan terjalin rapi di Timor-Leste. Kelompok ini juga termasuk yang paling kejam, dan dengan sekitar 1.500 anggota, mungkin merupakan kelompok terbesar. Aitarak khususnya aktif di wilayah sekitar Hera, tempat sebuah perguruan tinggi politeknik, dan secara strategis berlokasi di sepanjang jalan utama yang melintas ke arah timur dari kota Dili. Kesatuan Aitarak di sana, dipimpin oleh Kepala Desa Hera, Mateus de Carvalho, bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pembunuhan terhadap dua orang mahasiswa pada Mei 1999. (Lihat studi kasus: Pembunuhan terhadap dua mahasiswa di Hera.)

Walaupun berbasis di Dili, unit-unit bersenjata Aitarak juga beroperasi di kabupaten lain. Selama 1999 ada banyak laporan tentang unit-unit Aitarak yang bermarkas atau beroperasi di Kabupaten Viqueque, Aileu, Liquiçá, Covalima, Ermera, dan Oecussi.[‡]

* Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini berdasar pada: UNTAET, DHRO-Dili, "Key Cases of HRVs/Abuses in Dili District," September 2002.

† Perkiraan gedung yang dibakar diambil dari "Survey of Population Movements and Refugees in Dili District," disusun oleh Dili District Returns Committee, Agustus 2000.

‡ Satu dokumen bertanggal 22 Agustus 1999 memuat daftar 62 orang anggota Aitarak di desa di

Dokumen-dokumen internal Aitarak yang ditemukan akhir 1999 menunjukkan bahwa kelompok tersebut diorganisasi seperti batalion tentara Indonesia. Di bawah ‘Komandan’ Eurico Guterres, terdapat seorang “Wakil Komandan” dan empat perwira staf—masing-masing untuk bidang Intelijen, Operasi, Personel, dan Logistik. Kekuatan utama dibagi ke dalam empat “Kompi” (A, B, C, dan D). Masing-masing Kompi dibagi menjadi “Peleton” dan selanjutnya tiap peleton terdiri atas beberapa ‘Tim.’

Aitarak dibentuk awal 1999, tetapi seperti kelompok milisi yang lain, akar kelompok ini bisa ditelusuri kembali pada kelompok paramiliter lama. Seperti yang digambarkan dalam Bab 6, Aitarak tumbuh langsung dari organisasi ‘pemuda’ pro-Indonesia, Gadapaksi (Garda Muda Penegak Integrasi), yang didirikan pada Juli 1995. Komandan Aitarak Eurico Guterres adalah pemimpin Gadapaksi sampai awal 1999. Seperti Gadapaksi, Aitarak memiliki hubungan dekat dengan intelijen militer, khususnya Satuan Tugas Intelijen Kopassus, yang dikenal dengan sebutan SGI.

Dukungan pemerintah untuk Aitarak nyaris tidak disembunyikan, setidaknya dalam periode pra-UNAMET. Selama lima bulan pertama 1999, para perwira senior TNI dan Polri berikut para pejabat sipil secara terbuka menghadiri pertemuan umum pro-otonomi di mana kelompok-kelompok Aitarak dibentuk atau mendapat penghormatan. Pertemuan itu mencakup pertemuan umum pro-otonomi di kantor gubernur, 17 April 1999, yang secara langsung mendahului amuk kekerasan di seluruh Dili yang dilakukan oleh Aitarak dan milisi-milisi lain, yang membuat 13 orang terbunuh. Dua hari kemudian Bupati Dili, Domingos Soares, menunjuk Komandan Aitarak, Eurico Guterres, menjadi kepala badan keamanan yang baru di tingkat kabupaten, Pam Swakarsa.

Dokumen-dokumen rahasia dan sadapan komunikasi menunjukkan bahwa banyak pejabat sipil dan TNI menganggap Aitarak sebagai sekutu, dan sangat terlibat dalam mengoordinasikan kegiatan-kegiatannya. Menurut dokumen-dokumen ini, dan bukti yang lain, pejabat penting yang terlibat adalah: Komandan Korem (sampai pertengahan Agustus) Kolonel Tono Suratman; Asisten Intelijen Korem Letnan Kolonel Bambang Wisnumurty; Komandan Sektor A pada masa Keadaan Darurat, Kolonel Gerhan Lantara; Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Endar Priyanto, dan penggantinya, Letnan Kolonel Soedjarwo; Kepala Kepolisian Resor, Letnan Kolonel (Polisi) Drs. Hulman Gultom; Gubernur Timor Timur Abílio Osório Soares; Bupati Dili, Domingos Soares; dan Walikota Dili, Mateus Maia.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, pihak yang berwenang di Dili jelas gagal bertindak terhadap milisi, bahkan ketika mereka jelas-jelas melanggar hukum. Seperti yang dikeluhkan seorang penduduk Dili kepada pengamat internasional, setelah terjadinya pembunuhan bergaya eksekusi yang dilakukan oleh seorang komandan Aitarak bernama Julio pada awal Agustus 1999:

Ermera Kecamatan Atsabe. Lihat: “Daftar Nama-Nama Dari Markas Besar Komando Pasukan Aitarak Sektor B,” 22 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #20). Sepucuk surat dari seorang anggota Aitarak kepada Eurico Guterres bertanggal 30 Maret 1999, mengisyaratkan bahwa satu cabang Aitarak telah didirikan di Ossu, Viqueque sebelum tanggal surat itu. Lihat: Surat dari Mário Pinto da Costa kepada Komandan [Aitarak], 30 Maret 1999 (Koleksi SCU, Doc #262).

“Saya ingin menekankan betapa pentingnya TNI dan senjatanya ditarik keluar dari Timor-Leste. Orang-orang seperti Julio akan terus menembak rakyat. Mungkin hari ini, mungkin besok atau lusa, Julio akan membunuh lagi. Orang-orang sadar bahwa dia bersenjata dan siap membunuh, tetapi tidak ada yang berbuat sesuatu untuk mencegahnya ... tidak tentara, tidak polisi, tidak ada satupun.”

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Sekitar seperempat dari semua korban di kabupaten Dili dibunuh sebelum 1 Juni, sementara sebagian besar yang lain dibunuh dalam tiga minggu sesudah pemungutan suara. Salah satu penjelasan mengenai banyaknya pembunuhan dalam periode pra-UNAMET adalah bahwa kota Dili menjadi tempat pengungsian bagi orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan milisi yang meningkat di desa-desa dan kabupaten-kabupaten di sekitar Dili. Beberapa ribu pengungsi seperti itu, yang datang ke Dili mencari tempat tinggal dan keselamatan, justru menjadi sasaran kekerasan milisi.

Di antara kejadian di kabupaten Dili, dan di seluruh Timor-Leste, yang paling terkenal adalah serangan pada 17 April terhadap sejumlah orang yang mengungsi di rumah tokoh prokemerdekaan terkemuka, Manuel Carrascalão. Serangan ini, yang dilakukan oleh Aitarak dan BMP, didukung oleh TNI dan Polri, mengakibatkan setidaknya 12 orang tewas, termasuk anak Carrascalão yang masih remaja, Manuelito. (Lihat studi kasus: Pembantaian di rumah Carrascalão.) Setelah penyerangan, sebagian besar pemimpin CNRT bersembunyi; beberapa pemimpin CNRT berada di bawah perlindungan polisi, bersama dengan sekitar 100 pendukung kemerdekaan lainnya.

Ada banyak korban lain kekerasan politik sebelum dan sesudah pembunuhan 17 April itu. Setidaknya tiga orang pendukung kemerdekaan dibunuh dalam Februari dan Maret—dan dalam ketiga kasus tersebut, para pelaku adalah anggota TNI dan atau Polri. Korban-korban itu adalah: Benedito de Jesus yang dibunuh dengan tembakan dari satu pos Brigade Mobil pada 14 Februari; Joaquim de Jesus yang ditembak mati pada 24 Februari oleh sejumlah orang yang membawa senjata otomatis dan mengenakan seragam TNI; dan João Teixeira, yang disiksa (dengan rokok yang menyala), dibunuh, dan dipenggal pada 11 Maret oleh satu kelompok yang diduga dipimpin oleh seorang petugas intelijen TNI.

Lebih banyak tokoh prokemerdekaan yang dijadikan sasaran dan dibunuh pada akhir April dan Mei 1999. Mereka mencakup: beberapa orang yang dibunuh di Hera akhir April;[†] seorang laki-laki bernama Eugenio António Fátima, yang dibunuh oleh

.....
* Carter Center, “Killing of Pro-Independence Supporter by Aitarak Militia Leader,” laporan tidak diterbitkan, Dili, 1 Agustus 1999.

† Menurut seorang penduduk Hera yang menulis surat kepada UNAMET pada Juli 1999, mereka yang meninggal adalah: seorang laki-laki bernama Luís Dias Soares, yang disiksa dan dibunuh oleh milisi dan tentara pada 20 April; dua orang lagi pemuda pro-kemerdekaan dibunuh pada 24 April dan di-

milisi pada 9 Mei; sembilan orang yang dibunuh oleh Aitarak dan TNI di Desa Quintal Kiik dan Quintal Boot pada 10 Mei; dan dua mahasiswa Institut Politeknik Hera yang dibunuh setelah ditahan dan dipukuli oleh pasukan TNI pada 20 Mei. (Lihat studi kasus: Pembunuhan terhadap dua mahasiswa di Hera.)

Sama dengan di kabupaten-kabupaten lain, tingkat pembunuhan mengalami penurunan yang berarti setelah kedatangan dan penempatan UNAMET awal Juni. Tidak ada pembunuhan yang dilaporkan selama Juni, tiga pembunuhan terjadi pada Juli, dan dua lainnya terjadi di tiga minggu pertama Agustus.^{*} Tetapi statistik itu hanyalah sebagian dari cerita. Ketika angka pembunuhan menurun, jenis-jenis lain pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut. Jarang ada hari yang berlalu tanpa laporan mengenai milisi mengancam, memukuli, dan membakar habis rumah orang yang dicurigai pendukung kemerdekaan. Kantor CNRT terus berada di bawah ancaman serangan, dan sebagian besar pemimpin CNRT bersembunyi. Sebaliknya, milisi bersenjata berkeliling kota dan desa dengan impunitas, membangun penghalang jalan, memeriksa surat-surat, menarik pajak jalan, membakar rumah, menembakkan senjata mereka, dan sebagainya—tanpa ada teguran apapun dari TNI maupun Polri.

Ilusi apapun bahwa kekerasan telah dikendalikan di Dili—atau bahwa aparat keamanan memang mau mengendalikan kekerasan—sepenuhnya berantakan pada 26 Agustus, hari terakhir kampanye pihak pro-Indonesia. Selama beberapa jam, para milisi menembakkan senjata, membakar rumah, dan menyerang para pendukung kemerdekaan. Di akhir hari itu, setidaknya delapan orang dibunuh, dua orang wartawan ditembak dan dilukai, kantor CNRT dirusak dan dijarah, dan beberapa rumah dibakar habis.

Laporan internal UNAMET tentang kejadian hari itu mencatat dan mengungkapkan keprihatinan serius mengenai kegagalan nyata Polri mencegah kekerasan yang dilakukan oleh milisi pro-Indonesia, menghentikan saat kekerasan terjadi, maupun menahan atau menangkap mereka yang diketahui bertanggung jawab. Salah satu laporan semacam itu mencatat bahwa kejadian pada hari itu “menegaskan tidak memadainya tindakan dari Polisi Indonesia.”[†] Dari sekian banyak contoh yang dikutip dalam laporan, yang menonjol adalah serangan milisi terhadap markas CNRT:

duga dikuburkan di depan pos TNI di Hera; seorang laki-laki bernama Bastian dan seorang lagi bernama Thomas dibunuh pada 25 April dan dilaporkan dimakamkan di Gereja Protestan di Akanunu Hera. Surat dari Carlos Gabriel Pinto kepada UNAMET, 5 Juli 1999.

* José Soares dilaporkan dibunuh pada 25 Juli oleh orang-orang tak dikenal yang menembaknya dari sebuah mobil yang melintas dekat Fatu-Ahi. Angelino Amaral (alias Sabino) ditembak mati di pagi hari 1 Agustus, di luar kantor distrik UNAMET di Dili. Para pelaku dalam kasus kedua diidentifikasi sebagai Julio do Amaral (atau Julio Câmara) seorang komandan peleton Aitarak, dan Zokin, seorang anggota milisi Mahidi dari Maubisse. Carter Center, “Killing of Pro Independence Supporter by Aitarak Militia leader,” laporan tidak diterbitkan, Dili, 1 Agustus 1999.

† UNAMET, “Report on the Incidents in Central Dili: 26 of August 1999,” dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

“Pukul 15.55, situasi dekat kantor CNRT begitu rentan. Dua truk berisi pasukan Brimob ditempatkan di luar CNRT. Walaupun ada banyak Polisi, satu mobil bergerak ke arah timur sepanjang Jalan 15 Oktober yang penumpang-penumpangnya terus menembakkan senjata. Ketika mobil itu mendekati penghalang jalan Polri, anggota-anggota Brimob memberi jalan kepada kendaraan itu. Mobil itu terus melaju di Jalan 15 Oktober dan berhenti sekitar 100 meter dari para petugas Polri. Para penumpang mobil itu turun dan tampak menembak ke arah sasaran yang tidak diketahui selama beberapa menit. Para penyerang lalu kembali ke mobil, berputar balik, dan berjalan ke arah yang berlawanan pada jalan satu arah itu, melewati para petugas Polri dan selanjutnya pergi menghilang. Para petugas Polri maupun Brimob samasekali tidak berusaha menghentikan kendaraan tersebut, atau mencegah para penumpangnya melepaskan banyak tembakan ke segala arah ... Setidaknya ada 20 orang Brimob yang ditempatkan pada penghalang jalan dengan peralatan lengkap anti-kerusuhan dan senapan serbu semi otomatis. Mereka jelas lebih banyak daripada para penyerang di dalam mobil tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun terhadap para penyerang.”

Satu dari banyak korban dari kekerasan hari itu adalah Bernardino Augusto Guterres (alias Bernardino da Costa), seorang mahasiswa yang dibunuh dengan tembakan di punggung dan lehernya oleh prajurit Brigade Mobil di wilayah Kuluhun, Dili. Banyak saksi mata yang mengatakan bahwa ketika ditembak, Bernardino saat itu sedang berdebat dengan polisi, memintanya menghentikan milisi yang sedang menyerang. Foto jasadnya muncul di halaman depan majalah *Time* pada Desember 1999. Dalam pernyataan di bawah sumpah kepada Komisi Pemilihan independen yang mengawasi proses pemungutan suara, seorang saksi mata menggambarkan insiden tersebut:

“Kerumunan orang berteriak kepada polisi untuk menghentikan milisi yang menembak-nembak. Salah satu dari mereka ... berdebat dengan polisi, sambil mengarahkan perhatian mereka kepada para milisi. Seorang polisi yang tidak memakai baret seperti teman-temannya ... mengatakan [kepada si pemuda] bahwa dia dapat menembak pemuda itu karena menghasut banyak orang. [Pemuda itu] lalu balik badan dan lari. Polisi lalu menembaknya dari jarak tiga langkah. Saya kemudian melihat luka tembak, satu di tengah punggung dan satu di leher bagian belakang si pemuda. Pemuda itu meninggal di tempat. Ketika ambulans datang untuk mengangkat tubuhnya, saya melihat lubang besar menganga di tenggorokan.”[†]

* UNAMET, “Report on the Incidents in Central Dili: 26 Agustus 1999,” dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

† Electoral Commission, E. Timor Popular Consultation, “Statement Minuted on Friday, 27 August 1999.”

Situasi merosot semakin drastis pada hari-hari sesudah pemungutan suara. Seperti di bagian lain di Timor-Leste, kelompok-kelompok milisi mulai melancarkan serangan kekerasan yang terencana. Mereka yang diduga atau memang merupakan pendukung kemerdekaan diancam, dipukuli, dan kadang-kadang dibunuh; rumah-rumah dibakari, dan harta benda dijarah atau dihancurkan. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, TNI dan Polri membiarkan kekerasan ini atau membantu melakukan kekerasan. Pemberlakuan Keadaan Darurat pada 7 September, samasekali tidak membawa perbedaan. Menurut laporan banyak orang kekerasan justru semakin buruk setelah 7 September 1999.

Karena takut kehilangan nyawa, ribuan penduduk mengungsi ke bukit-bukit di sekitar Dili, atau di tempat yang dianggap aman di dalam kota. Tetapi puluhan ribu orang diangkut secara paksa ke Timor Barat oleh tim gabungan TNI, Polri, dan milisi.⁷ Sebagian dikirim dengan kapal melalui pelabuhan Dili, tetapi kebanyakan dikumpulkan di kantor-kantor Polri dan TNI dan kemudian diangkut dengan truk.

Selama beberapa hari setelah pemungutan suara, sebagian besar staf UNAMET dipindahkan dari kantor-kantor mereka di luar kota ke markas besar di Dili. Di sana juga bergabung sekitar 1.500 pengungsi Timor-Leste dan sejumlah kecil pengamat dan jurnalis internasional yang belum meninggalkan Timor-Leste. Selama sepuluh hari (4-14 September) markas PBB secara efektif dikepung. Milisi mengancam akan melakukan kekerasan terhadap mereka yang ada di dalam, sambil terus membakar dan menjarah kota. Akhirnya, 14 September pagi hari, semua yang masih tinggal di kompleks itu—termasuk para pengungsi—dengan selamat diungsikan ke Darwin, Australia.

Tetapi kekerasan terus berlanjut. Dalam waktu hanya tiga minggu, puluhan orang dibunuh. Para korban mencakup: seorang anak laki-laki bernama Marcelino yang dibacok hingga mati dan kemudian dibakar oleh sekelompok milisi pada 1 September; sebanyak 15 orang dibunuh atau dihilangkan ketika milisi menyerang dan membakar kantor Keuskupan Dili (*Câmara Eclesiástica*) pada 5 September; seorang laki-laki bernama Thomas Americo dilaporkan disiksa dan dibunuh oleh anggota Aitarak pada 7 September; dan seorang pastor Jerman yang sudah berusia lanjut, Carolus Albrecht, ditembak di rumahnya sendiri oleh tentara pada 11 September. Satu dari beberapa saksi pembunuhan terhadap Marcelino memberikan keterangan sebagai berikut:

“Milisi berada di jalan bersama seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Namanya Marcelino, tetapi saya tidak mengetahui nama

.....
⁷ Satu telegram rahasia dari Komando Komando Distrik Militer Dili kepada Danrem bertanggal [7] September 1999, melaporkan bahwa 17.620 orang saat itu berada di berbagai tempat di dalam kota Dili, menunggu diungsikan. Perincian tempatnya diberikan sebagai berikut: Koramil Dili Timur (120 orang), Koramil Dili Barat (1.000 orang), Museum (3.000 orang), kantor Polda dan Polres Dili (6.000 orang), Pelabuhan Dili (3.000 orang), Koramil Metinaro (1.000 orang), dan Kodim Dili (3.500 orang). Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Danrem 164/WD dan lain lain. Telegram rahasia STR/--/1999, [7] September, 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #44).

belakangnya ... Ada sekitar 10 atau 20 milisi yang berusaha memenggal kepala Marcelino. Mereka membacok leher Marcelino tetapi ia tidak langsung meninggal. Kami bilang itu terjadi karena ia belum waktunya meninggal. Semua milisi membawa pisau. Semua pisaunya panjang. Ada banyak darah. Seperti membunuh seekor sapi ... Karena Marcelino tidak segera meninggal, milisi lalu mengambil minyak tanah dari toko makanan [di dekatnya]. Milisi kemudian membakar toko makanan itu dan kemudian menyiram tubuh Marcelino dengan minyak tanah. Milisi kemudian melemparkan badan Marcelino ke kobaran api tersebut ... Polisi Indonesia berada di belakang Milisi, di jalan. Mereka melihat apa yang sedang dilakukan oleh Milisi. Mereka dapat melihatnya. Mereka ada di sana sepanjang waktu ketika milisi membacok Marcelino dan melemparkannya ke dalam api.”

Salah satu kasus kekerasan sesudah pemungutan suara di Dili yang paling banyak dilaporkan adalah serangan pada 6 September terhadap kompleks kediaman Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, tempat sekitar 5.000 orang mengungsi setelah pemungutan suara. Setidaknya satu orang terbunuh dalam serangan tersebut dan beberapa terluka, termasuk setidaknya seorang anak kecil. Namun, serangan terhadap kediaman Uskup menjadi mencolok bukan karena jumlah orang yang dibunuh, melainkan karena fakta bahwa serangan itu merupakan satu dari empat serangan yang hampir sama terhadap tempat pengungsian di Dili dalam waktu 24 jam. Serangan-serangan terkoordinasi ini, yang semuanya mengakibatkan setidaknya 17 orang meninggal, menandai metode yang digunakan bersama oleh Milisi, Polri, dan TNI di seluruh wilayah Timor-Leste untuk mendesak penduduk lari ke Timor Barat. (Lihat studi kasus: Pemindahan paksa dan pembunuhan pengungsi di Dili).

Sementara TNI dan Polisi memfasilitasi, dan sangat mungkin mengoordinasi, serangan-serangan oleh milisi, ada kejadian-kejadian lain di mana pasukan TNI secara langsung menjadi pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia. Salah satu kasusnya adalah pembunuhan terhadap wartawan Belanda Sander Thoenes pada 21 September 1999. Ada bukti yang meyakinkan bahwa Thoenes dibunuh oleh anggota Batalion Infanteri 745, yang baru saja mencapai Dili dari markasnya di Kabupaten Lautém. Menurut bukti tersebut Sander Thoenes dibunuh dengan satu tembakan di punggung. Namun, tubuhnya dipotong dengan parah; satu telinga dan sebagian pipinya dipotong lepas dengan tingkat ketepatan yang mendekati pembedahan. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)

.....
* Pernyataan di bawah sumpah oleh Isabel da Conceição, direkam dan dikumpulkan di Australia, 11 November 1999.

Ermera (Kodim 1637)

- Dandim: Letnan Kolonel Muhammad Nur
- Bupati: Constantino Soares
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Ery T.B. Gultom
- Milisi: Darah Integrasi, Darah Merah, Naga Merah, Tim Pancasila, Aitarak
- Jumlah yang dibunuh: 82 orang

Kabupaten Ermera adalah tempat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius.^{*} Setidaknya 82 orang dibunuh selama 1999. Kebanyakan korban yang meninggal adalah orang yang dianggap maupun memang merupakan pendukung kemerdekaan berikut keluarga mereka, termasuk seorang ibu dan lima anaknya yang masih kecil. Korban juga mencakup 11 orang pendukung pro-otonomi yang dilaporkan dibunuh oleh Falintil. Pengungsian penduduk dari tempat tinggal mereka dimulai sejak Februari 1999, dan sekitar 17.000 orang dipindahkan secara paksa dari rumah mereka pada September. Beberapa kejadian pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dilaporkan terjadi pada tahun itu.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, kekerasan terburuk di Ermera terjadi dalam periode pra-UNAMET dan setelah pemungutan suara. Namun berbeda dengan kebanyakan kabupaten lain, para pelaku kekerasan di Ermera, khususnya dalam tahap pra-UNAMET, sama banyak antara prajurit TNI dan milisi. Pola ini tampaknya bersumber dari kesulitan sebelumnya untuk merekrut milisi di kabupaten ini.

Milisi dan pihak berwenang

Ada beberapa kelompok milisi yang beroperasi di Ermera pada 1999, seperti Darah Integrasi, Tim Pancasila, dan Aitarak. Darah Integrasi adalah kelompok yang paling besar, dengan ratusan anggota. Kelompok ini beroperasi di tiga dari lima kecamatan di kabupaten ini (Ermera, Letefoho, dan Hatolia) baik sendiri maupun melalui dua kelompok bawahannya, Darah Merah,[†] dan Naga Merah. Dua kelompok ini masing-masing berbasis di Kecamatan Ermera dan Hatolia. Kelompok milisi yang dikenal sebagai Tim Pancasila, berbasis di Kecamatan

.....
^{*} Kecuali disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada: UNTAET, DHRO-Ermera, "Report on Human Rights Violations During 1999: Ermera District," [Maret 2000]; dan Helene van Klinken, "Taking the Risk, Paying the Price: East Timorese Vote in Ermera," dalam Tanter, Selden, dan Shalom (penyunting), *Bitter Flowers, Sweet Flowers: East Timor, Indonesia, and the World Community*, Rowman & Littlefield, 2001, halaman 91-107. Helene van Klinken adalah Pejabat Urusan Politik UNAMET yang ditempatkan di Ermera pada 1999.

[†] Pemimpin milisi Darah Merah adalah Lafaek Saburai, penulis surat 'Operasi Pembersihan' pada Maret 1999, yang dibahas pada Bab 5 laporan ini. Walaupun banyak hal yang ditulis mengenai surat tersebut, dan ia disebut-sebut sebagai seorang pengawal Prabowo Subianto, Lafaek Saburai tidak muncul sebagai pemain utama pada 1999.

Atsabe, bagian paling selatan Kabupaten Ermera, sementara Aitarak beroperasi di Kecamatan Railako dan Atsabe.^{*}

Seperi di hampir semua kabupaten, kelompok-kelompok milisi ini memiliki akar sejarah dan kelembagaan setidaknya sejak tahun-tahun pertama invasi Indonesia. Dengan bantuan sejumlah tokoh penting seperti Tomás Gonçalves, tentara Indonesia membentuk pasukan milisi yang dikenal sebagai ‘Partisan’ saat invasi 1975. Pertengahan dasawarsa 1990-an, pasukan Partisan mendapatkan latihan militer secara teratur dari TNI. Bersama Wanra dan Kamra yang dibentuk dalam dasawarsa 1980-an, mereka adalah unsur penting dalam strategi kontrapemberontakan yang dibuat TNI.

Kesatuan-kesatuan yang lebih tua ini—Partisan, Wanra, dan Kamra—tetap ada pada 1999, dan dipersenjatai serta ditugaskan oleh TNI untuk melaksanakan operasi intelijen dan keamanan. Pada 1999 anggota-anggota Partisan terlihat memakai seragam TNI dan membawa senjata standar otomatis TNI (SKS); dan mereka menerima gaji Rp75.000,00 dan beras setiap bulan. Kekuatan Partisan pada 1999 diperkirakan seluruhnya 130 orang.

Kelompok-kelompok Partisan dan Wanra ini juga menjadi sumber penggalangan kelompok-kelompok milisi baru awal 1999. Para pemimpin Partisan dan Wanra menjadi pemimpin-pemimpin kelompok milisi baru, begitu pula dengan para anggotanya. Komandan Wanra Ermera, Miguel Babo, menjadi komandan Darah Integrasi, dan orang yang lama menjadi pemimpin Partisan, António dos Santos menjadi wakil komandan kelompok ini dan secara *de facto* menjadi komandannya.

Semua kelompok ini—Partisan, Wanra, dan milisi-milisi baru—berhubungan dekat dengan pihak yang berwenang dan khususnya dengan SGI. António dos Santos, Wakil Komandan Darah Integrasi, disebut sebagai pemimpin satu kelompok SGI dan sekaligus menjadi Kepala Desa di Letefoho. Ia juga penyalur utama gaji dan beras bagi anggota milisi; ia dilaporkan datang ke Hatolia setiap bulan pada 1999 untuk membagikan uang sejumlah Rp100.000,00 dan beberapa kilogram beras kepada anggota-anggota milisi. Dua komandan utama Partisan di Gleno pada 1999 adalah Kapten Abas dan Sersan Heru, keduanya personel TNI yang bertugas pada SGI. Akhirnya, ada bukti bahwa Komandan pos SGI di Kecamatan Atsabe (Pos SGI Kresna 12 Atsabe) sangat terlibat dalam koordinasi kelompok-kelompok milisi Aitarak di sana.[†]

Milisi juga menerima dukungan politik, finansial, dan logistik dari komando reguler TNI. Satu dokumen dari Ermera, yang dibahas dalam Bab 8, menunjukkan dengan

^{*} Satu dokumen bertanggal 22 Agustus 1999 memuat daftar nama 62 anggota Aitarak di Desa Atudame, Kecamatan Atsabe. Lihat: “Daftar Nama-Nama Dari Markas Besar Komando Pasukan Aitarak Sektor B,” 22 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #20).

[†] Komandan SGI itu, Amran Odhe, adalah salah satu penandatanganan dari daftar nama 62 anggota milisi Aitarak di desa Atudame, Kecamatan Atsabe. Daftar nama itu juga ditandatangani oleh Danramil Atsabe, Letnan M. Roni, dan Kapolsek Atsabe, Sersan Mayor I Ketut Suriana. Lihat “Daftar Nama-Nama Dari Markas Besar Komando Pasukan Aitarak Sektor B,” 22 Agustus 1999 (Koleksi SCU, Doc #20).

jelas keterlibatan resmi militer dalam distribusi dana dan perlengkapan untuk milisi. Dokumen itu adalah sepucuk surat dari Dandim Ermera, Letnan Kolonel Muhammad Nur, kepada Bupati, bertanggal April 1999, dan dalam surat itu ia meminta uang Rp104 juta (USD13.886) untuk membayar gaji bulanan sebesar Rp200.000,00 (USD26.66) untuk setiap anggota Pam Swakarsa (yaitu milisi) yang baru direkrut di Kabupaten Ermera. Dalam suratnya, Letnan Kolonel Nur juga meminta 6.405 kg beras untuk dibagikan kepada anggota-anggota milisi yang baru.^{*}

Polisi di Kabupaten Ermera tidak begitu banyak membantu milisi dibandingkan di kabupaten-kabupaten lain, setidaknya dalam empat atau lima bulan pertama 1999. Salah satu sebabnya, tampaknya, adalah bahwa Kepala Kepolisian Resor Ermera, Letnan Kolonel Ery T.B. Gultom, bersimpati pada perjuangan kemerdekaan dan menggunakan wewenangnya untuk melindungi dan membantu anggota-anggota CNRT yang dalam bahaya.

Namun posisi Polri berubah pada Mei 1999 ketika Letnan Kolonel Gultom dipindahkan, dan pasukan Brimob ditempatkan di kabupaten ini. Walaupun ada beberapa petugas Polri yang bertindak berani menyelamatkan nyawa banyak orang, namun setelah Mei, Polri lebih pasif, yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada milisi untuk beraksi. Misalnya para saksimata pembunuhan terhadap dua anggota staf lokal UNAMET pada 30 Agustus di Boboe Leten mengatakan bahwa pasukan Brimob bersenjata berada dalam posisi untuk mencegah dan menghentikan serangan, tetapi tidak berbuat apa-apa. Pada hari yang sama, tidak lama setelah satu rombongan UNAMET ditembak milisi, perwira Brimob yang bertugas mengatakan kepada staf pemilihan dan Polisi Sipil UNAMET di Atsabe: "Kami menyelamatkan Anda hari ini: Besok, kami tidak tahu."

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, organisasi pro-otonomi, FPKD, juga berperan penting mendukung milisi, terutama dengan menjadi penyalur dana resmi (dan mungkin juga yang tidak resmi). Dana semacam itu disalurkan melalui Kepala Keamanan FPKD, yang juga menjadi Wakil Komandan Darah Integrasi, António dos Santos.

Namun berbeda dengan beberapa kabupaten lain, terutama kabupaten yang berbatasan, yaitu Bobonaro dan Liquiçá, milisi di Ermera tidak mendapat dukungan kuat dari bupati, Constantino Soares. Sebaliknya, Soares sering memberikan bantuan kepada anggota CNRT dan Front Klandestin yang berada dalam bahaya. Dan sementara ia secara formal menjadi ketua BRTT tingkat kabupaten, ia hanya sedikit memberikan dukungan yang diharuskan kepada perjuangan pro-otonomi dan kelompok-kelompok milisi. Sikapnya dan keberadaan jaringan CNRT dan klandestin yang kuat di kabupaten ini, membantu menjelaskan pertumbuhan lambat milisi di Ermera. Hal ini juga menjelaskan mengapa Soares tetap dihormati di kabupaten Ermera bahkan setelah referendum.

^{*} Hanya anggota yang baru direkrut, semuanya berjumlah 175 orang di Ermera, yang akan menerima Rp200.000,00 (USD26,66) per bulan. Sedang anggota lama, yang jumlahnya sekitar 160 orang, diberi uang Rp125.000 per bulan (USD16,66). Surat dari Letnan Kolonel Muhammad Nur, Komandan Distrik Militer 1637/Ermera kepada Bupati Ermera, "Permohonan Uang Saku PAM Swakarsa," Juni 1999. Salinan dokumen ini dimiliki penulis.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Bulan-bulan awal 1999 di Ermera ditandai kehadiran ribuan pengungsi dalam negeri dari kabupaten-kabupaten tetangga. Serangan ancaman dan intimidasi oleh milisi di Kabupaten Liquiçá, misalnya, mendorong ribuan orang menyelamatkan diri ke Kecamatan Hatolia pada Januari dan Februari 1999, sementara yang lain datang dari Kabupaten Bobonaro dan beberapa bagian dari Kabupaten Ermera sendiri. Ketika UNAMET tiba pada Juni, jumlah pengungsi dalam negeri di kabupaten ini diperkirakan 3.000-4.000 orang.

Ketegangan memuncak Februari 1999 ketika TNI dan para pemimpin pro-otonomi melaporkan bahwa 11 orang anggota milisi—kemungkinan Mahidi dari Kabupaten Ainaro yang bertetangga—ditahan di Ermera, lalu dipindahkan ke tahanan Falintil di wilayah Kecamatan Hatolia, dan kemudian dibunuh. Jenazah mereka dilaporkan ditemukan di Fatubessi, pada Mei 1999, dan seorang anggota CNRT dikatakan diadili karena perannya dalam penculikan tersebut. Perincian lebih lanjut mengenai pembunuhan itu sulit dikonfirmasi, dan Falintil menyangkal terlibat, tetapi pembunuhan itu memberikan dorongan tambahan pada kegiatan pro-otonomi, dan pada penggalangan kelompok-kelompok milisi baru. Demikian juga laporan penahanan terhadap enam anggota milisi oleh Falintil selama sekitar satu minggu pada awal April.

Akhirnya, pada awal April 1999 pembunuhan terhadap para pendukung kemerdekaan dimulai, yang kemudian menggerakkan kegiatan intimidasi dan teror selama dua bulan terhadap para pendukung kemerdekaan, yang membuat setidaknya 20 orang mati. Berbeda dengan pola di kabupaten lain, banyak pembunuhan ini tidak dilakukan oleh milisi tetapi oleh kesatuan-kesatuan TNI—termasuk Kodim dan pasukan tempur—yang bertindak sendiri atau bersama pasukan-pasukan milisi. Lebih jauh lagi, keadaan saat pembunuhan itu terjadi dengan kuat menunjukkan bahwa pembunuhan itu adalah bagian dari suatu kegiatan yang dikoordinasikan oleh TNI.

Pada 9 April 1999, Dandim Letnan Kolonel Muhamad Nur bertemu dengan para pemimpin Darah Integrasi, FPDK, dan BRTT di ibukota kabupaten, Gleno. Pada hari berikutnya, 10 April, TNI dan milisi bersama-sama membakar habis kantor CNRT di Gleno dan membunuh anggota DPRD setempat dan pendukung CNRT yang terkenal, António Lima. Ada beberapa pembunuhan lain yang terjadi dalam minggu-minggu berikutnya, termasuk pembunuhan terhadap empat orang di Desa Talimoro dalam dua hari. Kekerasan berlanjut tanpa henti selama Mei 1999. Tiga orang dibunuh oleh pasukan TNI di Desa Poerema, Kecamatan Hatolia, pada 10 Mei 1999. Enam orang lagi dibunuh oleh gabungan pasukan milisi-TNI di Desa Atara, Kecamatan Atsabe pada 16 Mei.

Dengan kedatangan UNAMET di kabupaten ini pada Juni, kekerasan fisik yang terbuka pun surut, tetapi suasana intimidasi tetap ada, dan terus memburuk sampai menjelang hari pemungutan suara. Penduduk desa dan pekerja bantuan kemanusiaan yang berusaha membantu pengungsi dalam negeri di kabupaten

Ermera menjadi sasaran khusus permusuhan kelompok-kelompok pro-otonomi. Demikian juga para aktivis mahasiswa yang datang ke Kabupaten Ermera pada Juli untuk melaksanakan kegiatan pendidikan untuk pemilih, dan dalam kenyataannya mengampanyekan kemerdekaan. Pada tingkat yang hanya terlihat di sedikit kabupaten lain, staf lokal UNAMET juga menjadi sasaran kemarahan dan intimidasi milisi dan TNI.

Dalam beberapa jam setelah pemungutan suara, pola intimidasi ini meletus lagi menjadi kekerasan terbuka. Antara 30 Agustus dan 22 September, setidaknya 67 orang dibunuh di kabupaten ini. Setidaknya lima orang di antaranya adalah staf lokal UNAMET. Selain itu, dalam periode ini hampir 17.000 orang melarikan diri atau dipindahkan secara paksa dari rumah mereka dalam serangan teror dan kekerasan yang sistematis. Rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya, dan hampir semua bangunan umum, dijarah dan dibakar.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, serangan kekerasan setelah pemungutan suara di Ermera dilakukan bersama oleh TNI, Polri, dan Milisi. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, evakuasi dan penghancuran dipusatkan di wilayah-wilayah tertentu—terutama yang paling dekat dengan jalan-jalan besar menuju Timor Barat. Yang mengalami kerusakan paling berat adalah Kecamatan Atsabe, dari mana sekitar 50% dari penduduk dipindahkan secara paksa. Wilayah-wilayah yang jauh dari jalan besar, dan di mana ada Falintil dalam jumlah memadai, seperti bagian-bagian dari Hatolia, tidak terlalu banyak mengalami kerusakan.

Korban-korban pertama dari kekerasan dalam masa setelah pemungutan suara di Ermera dan di Timor-Leste secara keseluruhan adalah dua staf lokal UNAMET, João Lopes dan Orlando Gomes, yang dipukuli dan ditikam hingga mati ketika membawa kotak-kotak suara dari tempat pemungutan suara di Boboe Leten ke kendaraan-kendaraan UNAMET. Staf lokal yang ketiga, Alvaro Lopes, luka parah dalam serangan yang sama dan ditinggalkan agar mati sendiri, tetapi ternyata selamat. Penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa serangan itu dilaksanakan dengan sepengetahuan penuh komandan Komando Rayon Militer Atsabe, dan bahwa pasukan TNI dan Brimob berada di tempat kejadian tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikan serangan. (Lihat studi kasus: Pembunuhan staf lokal UNAMET di Boboe Leten.)

Serangan di Boboe Leten bukanlah insiden yang terpisah. Setelah pemungutan suara, milisi terus mengancam dan menyerang staf dan instalasi UNAMET di seluruh kabupaten ini. Akibatnya, semua staf UNAMET dipanggil pulang ke kantor regionalnya di Gleno. Di sanapun keamanan mereka tidak dapat dijamin, karena milisi berkeliaran di jalan-jalan menembakkan senjata, menyalut bangunan-bangunan dengan api, dan menarik orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan keluar dari mobil mereka di penghadangan jalan.

Dalam sejumlah kejadian, terutama di Boboe Leten, milisi bersenjata yang disertai oleh TNI dan Polri mencegah staf UNAMET meninggalkan tempat pemungutan suara, atau berusaha mencegah mereka membawa kotak suara. Pada 31 Agustus,

milisi melempari dengan batu dan menembakkan senjata ke helikopter UNAMET yang mendarat di Gleno untuk mengambil kotak-kotak suara. Polri tidak bertindak mencegah serangan itu. Seorang MLO (Perwira Penghubung Militer) UNAMET dilaporkan melihat seorang polisi menyerahkan sepucuk senjata kepada seorang milisi di tempat kejadian sesaat sebelum serangan.

Saat kekerasan memuncak, staf UNAMET diungsikan ke Dili yang relatif aman. Dengan kepergian UNAMET, keadaan di Ermera memburuk dan pembunuhan dengan sasaran tertentu meningkat. Salah satu yang dipilih untuk dibunuh adalah Ana Xavier da Conceição Lemos. Ia adalah anggota aktif organisasi perempuan prokemerdekaan, OMT (Organização das Mulheres Timorenses – Organisasi Perempuan Timor), yang bekerja di UNAMET sebagai pengatur antrean pada waktu pemungutan suara. Dengan bantuan seorang petugas Brimob, ia berhasil mencapai Gleno segera setelah penutupan pemungutan suara. Malam harinya ia diringkus dan dipukuli di rumahnya oleh seorang bintanga TNI, Sersan Melky, dan beberapa laki-laki lain. Akhirnya ia berhasil mencapai markas UNAMET di Gleno dan menyertai rombongan UNAMET ke Dili. Tetapi beberapa hari kemudian ia kembali ke Gleno untuk melihat apakah anak-anaknya dalam keadaan aman. Saat kembali ia awalnya ditahan di Kodim dan kemudian diserahkan kepada milisi, yang memerkosakan dan membunuhnya. (Lihat studi kasus: Pemerkosaan dan pembunuhan Ana Lemos.)

Semua ini hanya beberapa contoh terkenal dari kekerasan yang mengerikan dan mencengkeram Ermera selama September. Kasus yang kurang begitu diketahui adalah kasus Georgina Imaculada Tilman Ribeiro, yang dibunuh bersama lima anaknya (berusia 2 hingga 12 tahun), setelah ia pergi ke tempat yang tampak aman di Timor Barat. Seperti Ana Lemos, Georgina Tilman adalah anggota OMT, dan suaminya adalah seorang anggota aktif Front Klandestin. Setelah berhasil melintasi perbatasan, pada 18 September ia bersama anak-anaknya kembali masuk ke Timor-Leste dengan orang-orang yang mengaku dikirim oleh suaminya. Mereka berenam, Georgina bersama lima anaknya, kemudian menghilang. Jasad Georgina bersama kelima anaknya ditemukan pada Februari 2000, dikuburkan secara serampangan di dasar sungai kering, di kampung Mahir sekitar 13 km dari kota Atabae, di Kabupaten Maliana. Mereka yang diduga sebagai pelaku atas kejahatan ini antara lain adalah Sersan Melky, bintanga TNI yang juga diduga memerkosakan dan membunuh Ana Lemos.

Lautém (Kodim 1629)

- Dandim: Letnan Kolonel Sudrajat A.S.
- Bupati: Edmundo da Conceição Silva
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Irsan Wijaya
- Milisi: Tim Alfa
- jumlah yang dibunuh: 53 orang

Di Lautém terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia pada 1999, yang kebanyakannya terjadi di masa setelah pemungutan suara.^{*} Sedikitnya 53 orang dibunuh pada tahun itu, dan 51 orang di antaranya terbunuh selama tiga minggu pada September. Dalam periode yang sama, diperkirakan sekitar 6.000 orang melarikan diri ke Timor Barat, dan ribuan lainnya ke pergunungan, untuk menghindari kekerasan dan penghancuran yang memuncak.

Milisi dan pihak berwenang

Para pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia di Kabupaten Lautém adalah anggota kelompok milisi lokal, Tim Alfa, dan prajurit TNI dari berbagai kesatuan, terutama Kopassus dan Batalion 745, yang bermarkas di Los Palos. Tim Alfa memiliki hubungan khusus dengan Kopassus dan beroperasi di bawah komandonya. Batalion 745 kurang berhubungan dengan Tim Alfa dan lebih sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sendiri.

Tim Alfa dibentuk oleh Kopassus pada pertengahan dasawarsa 1980-an untuk menyusup ke gerakan klandestinin dan membantu operasi tempur. Hubungan kelembagaan itu bertahan hingga 1999. Tim Alfa beroperasi dari markas Kopassus di Laurara, di Los Palos Kota, dan mendapatkan dukungan logistik dan transportasi dari Kopassus. Tim Alfa secara langsung dikendalikan oleh bintang Kopassus Sersan Syaful Anwar dan komandan Kopassus untuk wilayah Kabupaten Lautém, Letnan Rahman (alias Rahmat) Zulkarnaen.

Hubungan langsung antara Tim Alfa dan Kopassus dibenarkan oleh seorang mantan pemimpin Tim Alfa, Joni Marques dalam sidang pengadilan terhadapnya pada 2001. Bersaksi di bawah sumpah, Marques mengatakan bahwa ia telah dilatih oleh Kopassus, dan bahwa pada 1993 ia diundang ikut dalam latihan militer bersama angkatan bersenjata Australia di Bandung, Indonesia, dengan menyamar sebagai seorang prajurit TNI.[†] Kepada pengadilan ia juga mengatakan bahwa pada 1999 Tim Alfa melapor ke markas Kopassus di Los Palos: “Sebagai anggota Tim Alfa”, katanya, “saya harus pergi ke sana.”[‡]

Tim Alfa juga mendapat dukungan kuat dari Bupati Lautém, Edmundo da Conceição Silva. Dukungan Bupati ini tidak mengherankan karena ia punya hubungan dekat dengan Kopassus, sebagai anggota kehormatan pasukan itu. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, pendanaan bagi milisi pertama-tama disalurkan melalui kantor bupati, tetapi kemudian melalui lembaga lain, termasuk TNI, untuk selanjutnya disalurkan kepada milisi. Bupati juga menjadi Ketua Umum BRTT, dan anggota-

^{*} Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada UNTAET, DHRO-Lautem, “Lautem District Events of 1999 Report,” Maret 2002; Dili District Court, Special Panel for Special Crimes, “Judgement” in the case of Joni Marques et al., 11 Desember 2001; dan General Prosecutor of the Democratic Republic of East Timor, Indictment against Edmundo da Conceição Silva et al., 15 November 2002.

[†] Dalam kesaksian yang sama, Marques mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan latihan militer dari Kopassus sejak tahun 1986. Dili District Court, “Judgement,” Joni Marques et al., halaman 55.

[‡] Dili District Court, “Judgement,” Joni Marques et al., halaman 53.

anggotanya menjaga keamanan tempat tinggalnya. Ada tuduhan yang belum dapat dikonfirmasi bahwa Bupati membagikan 117 pucuk senjata kepada milisi dan/atau BRTT pada awal 1999.

Batalion 745 adalah pasukan yang beroperasi lepas dari Kopassus dan kadang-kadang terlibat konflik dengannya, dengan markas di Desa Fuiloro. Anggota-anggota Batalion 745 secara langsung terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang luas pada 1999, yang meliputi pembakaran rumah, intimidasi, pemukulan, dan setidaknya pembunuhan sewenang-wenang terhadap 21 orang. Sebagian besar pembunuhan itu dilakukan ketika batalion tersebut ditarik dari Lautém menuju Dili dan ke Timor Barat akhir September. Yang paling terkenal, anggota-anggota batalion ini bertanggung jawab atas pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes di Dili pada 21 September 1999. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)

Batalion 745 didirikan pada 1976 dan merupakan satu dari dua batalion yang disebut sebagai batalion tempur 'organik' di Timor-Leste. Sebagian besar prajuritnya adalah orang Timor-Leste, sementara kebanyakan perwira yang memimpin adalah orang Indonesia. Menjelang referendum 1999, ada petunjuk-petunjuk bahwa sejumlah prajurit Timor-Leste dalam batalion ini bersimpati pada kemerdekaan. Karena itu para komandan kesatuan ini mengambil tindakan untuk memastikan bahwa prajurit-prajurit tersebut tidak dilibatkan dalam operasi-operasi militer, dan dijauhkan dari proses perencanaan. Dalam masa sesudah pemungutan suara, sebagian dari prajurit tersebut dijadikan sasaran dan dibunuh. Namun, batalion ini bekerjasama dengan anggota-anggota Tim Alfa, dan bahkan mengizinkan mereka untuk melihat daftar pengungsi yang dibuat oleh batalion itu, untuk memeriksa apakah di dalamnya ada pendukung kemerdekaan.

Kesatuan-kesatuan dan perwira-perwira militer lainnya di kabupaten ini juga terlibat dalam kekerasan, walau kurang menonjol. Markas Kodim, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sudrajat, dilaporkan digunakan sebagai tempat penahanan dan pemukulan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pendukung kemerdekaan. Saksimata, termasuk pemimpin milisi Joni Marques, telah bersaksi di bawah sumpah di pengadilan bahwa sejumlah orang disiksa dan dibunuh di sana, dan bahwa tubuh mereka ditemukan tidak jauh dari sana.* Dua batalion tempur 'non-organik', yaitu Batalion 621 dan Batalion 623, yang waktu itu bermarkas di Lautém, tidak sering muncul dalam kesaksian-kesaksian tentang kekerasan.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Selain dari dua pembunuhan yang terjadi pada April 1999, insiden pelanggaran hak asasi manusia dalam periode pra-UNAMET dan periode UNAMET relatif sedikit.†

* Dili District Court, "Judgement," Joni Marques et al.

† Satu perkecualian penting adalah penyiksaan dan pembunuhan terhadap Evaristo Lopes pada April 1999. Para saksi termasuk pemimpin milisi Joni Marques telah bersaksi bahwa Lopes disiksa dan dieksekusi ketika berada dalam penahanan, dan di bawah pengawasan langsung bintara Kopassus setempat, Sersan Syaful Anwar. Lihat Dili District Court, "Judgement," Joni Marques et al., halaman 53-57.

Tetapi, seperti di kabupaten-kabupaten lain, banyak kejadian intimidasi yang berhubungan dengan kampanye ‘sosialisasi’ otonomi pemerintah.

Rapat-rapat umum ‘sosialisasi’ biasanya menampilkan perwira-perwira TNI, Bupati, dan pemimpin-pemimpin BRTT serta milisi. Di tengah rapat-rapat semacam ini para pembicara, sebagian membawa senjata, mengeluarkan ancaman. Ancaman yang biasa dilontarkan adalah: “UNAMET akan pergi 30 Agustus 1999, setelah itu kami akan membunuh kalian.” Staf UNAMET, baik internasional maupun lokal, juga menjadi sasaran ancaman dan intimidasi, termasuk dilempari dengan batu.

Insiden kekerasan yang paling menonjol di masa pra-pemungutan suara adalah pembunuhan terhadap *Liurai* Lautém, Verissimo Dias Quintas, pada 27 Agustus 1999. Menampilkan dirinya kepada Indonesia sebagai pendukung kekuasaan Indonesia, sebenarnya ia diam-diam menjadi pendukung kemerdekaan. Pada awal Agustus ia mengizinkan CNRT mendirikan kantor distrik mereka di kompleks tempat tinggalnya. Keputusan itu membuatnya menjadi sasaran khusus kubu pro-otonomi.

Laporan-laporan pada saat itu kuat mengisyaratkan keterlibatan pihak berwenang dalam pembunuhan tersebut. Polri membangun satu penghalang jalan sebelum kejadian itu, dan pasukan Polri maupun TNI yang berada di dekatnya tidak bergerak menghalangi serangan itu. Pasukan Kopassus dilaporkan menyediakan transportasi bagi para penyerang. Seperti dalam hampir semua kasus pembunuhan pada 1999, Polri hanya membuat penyelidikan sekadarnya dan tidak mengajukan dakwaan hukum terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku.

Penyelidikan-penyelidikan lebih lanjut mengenai pembunuhan Quintas mengukuhkan bahwa para penyerang itu mencakup anggota-anggota BRTT dan kelompok milisi Tim Alfa. Penyelidikan-penyelidikan juga menunjukkan bahwa para penyerang diarahkan dan dibantu oleh Kopassus, Polri, dan pejabat-pejabat sipil. Sebuah dakwaan yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste untuk Kejahatan Berat pada November 2002 secara eksplisit menyebut komandan Kopassus untuk kabupaten Lautém, Letnan Rahman Zulkarnaen, bintang Kopassus Sersan Syaful Anwar, Bupati Lautém Edmundo da Conceição da Silva, serta anggota-anggota Tim Alfa dan BRTT.*

Pada hari pemungutan suara, keadaan di Lautém tegang dan milisi bersenjata bebas berkeliaran di seluruh kabupaten ini. Namun seperti yang terjadi di seluruh Timor-Leste, tidak ada tindak kekerasan yang serius selama pemungutan suara. Sementara ketegangan kembali memuncak segera setelah pemungutan suara, dan gereja di Los Palos dibakar pada 5 September, kekerasan sungguh-sungguh terjadi setelah UNAMET dan para pengamat internasional meninggalkan kabupaten ini pada 7 September 1999.

Selama tiga minggu selanjutnya lebih daripada 50 orang dibunuh oleh Tim Alfa dan prajurit TNI. Pembunuhan terjadi hampir sepenuhnya di Kecamatan Los Palos dan Kecamatan Muro. Tidak ada pembunuhan yang dilaporkan terjadi di Kecamatan

* General Prosecutor of the Democratic Republic of East Timor, Indictment against Edmundo da Conceição Silva et al., 15 November 2002.

Iliomar, Tutuala, dan Luro, walaupun wilayah-wilayah yang disebut belakangan ini dibakar. Hampir semua korban adalah pendukung kemerdekaan yang terkenal.

Satu kejadian paling buruk pada masa sesudah pemungutan suara terjadi pada 25 September di dekat desa Verokoco, di jalan utama dari Lautém ke Baucau. Di sana anggota-anggota Tim Alfa menyergap dan mengeksekusi sekelompok orang, yakni lima rohaniwan dan empat orang awam.^{*} Korban mencakup seorang biarawati yang dibacok dengan sebilah parang ketika berlutut berdoa di pinggir jalan, yang kemudian dilemparkan ke sungai dan ditembak mati.[†] Walaupun para pelaku langsungnya adalah anggota Tim Alfa, bintangara Kopassus setempat, Sersan Syaful Anwar, juga terlibat dalam pembantaian. (Lihat studi kasus: Pembunuhan terhadap rohaniwan Los Palos.)

Anggota-anggota Batalion 745, termasuk komandan batalion, Mayor Jacob Sarosa, dan seorang komandan peleton, Letnan Camilo dos Santos, juga terlibat langsung dalam pelanggaran berat hak asasi manusia di masa setelah pemungutan suara, yang meliputi sebanyak 21 eksekusi di luar hukum. Beberapa pembunuhan tersebut terjadi di wilayah sekitar markas batalion (misalnya di Asalaino, Home Baru, dan Motolari). Tubuh dari sebagian yang meninggal ditemukan di dalam sumur yang ada di dalam kompleks batalion.

Pada 20 September, setelah sebagian besar anggota batalion telah pergi dengan kapal menuju Indonesia, sekitar 120 prajurit dan perwira, termasuk Mayor Sarosa dan Letnan Camilo, membentuk satu rombongan dan mempersiapkan kepergian ke Dili dan terus ke Timor Barat. Sebelum berangkat, Letnan Camilo dilaporkan memberikan penjelasan ringkas kepada para prajurit. Seorang perwira Timor-Leste yang berada di sana kemudian mengatakan kepada para penyelidik PBB bahwa Letnan Camilo berkata kepada para prajurit: "Kalau kalian menemukan apa saja di perjalanan ... tembak saja."^{*} Menurut saksi tersebut, Komandan Batalion, Mayor Sarosa, mendengar perintah tersebut ketika disampaikan. Pada hari yang sama, prajurit TNI memukuli dan kemudian membunuh tiga orang di dekat gudang beras di Lautém. Mayor Sarosa dan Letnan Camilo dilaporkan ada di tempat kejadian, tetapi tidak melakukan apa-apa. Hari berikutnya, rombongan itu bergerak keluar dari Lautém menuju Timor Barat, dengan meninggalkan jejak pembunuhan dan penghancuran setelah keberangkatannya. Ketika rombongan itu mencapai Dili, dua hari kemudian, sedikitnya 13 orang lagi dibunuh oleh batalion itu. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.)

Selain pembunuhan, dalam masa setelah pemungutan suara anggota-anggota Tim Alfa, Kopassus, dan Batalion 745 melancarkan serangan sistematis untuk

.....
^{*} Lihat Dili District Court, "Judgement," Joni Marques et al.

[†] Mayat-mayat yang diidentifikasi dalam proses pengadilan adalah: Suster Emilia Cazzaniga, Suster Celeste de Carvalho, Bruder Jacinto Xavier, Bruder Fernando dos Santos, Bruder Fernando da Conceição, Agus Muliawan, Cristovão Rudi Barreto, Titi Sandora Lopes, dan Izinho Freitas Amaral. Lihat Dili District Court, "Judgement," Joni Marques et al.

[‡] Dikutip dalam Cameron W. Barr, "A Brutal Exit: Battalion 745," Bagian 3 dari 4, *Christian Science Monitor*, 16 Maret 2000.

menghancurkan infrastruktur di wilayah itu, dan mendeportasi sejumlah besar penduduk. Walaupun tingkat penghancurannya berbeda-beda—yang paling parah adalah Kecamatan Luro—sebagian besar bangunan di kabupaten Lautém, termasuk bangunan-bangunan pemerintah, toko-toko, dan rumah-rumah pribadi, dibakar atau dihancurkan. Binatang-binatang ternak dibunuh dan sistem komunikasi dilumpuhkan. Menghadapi penghancuran dan kekerasan ini, banyak orang yang menyelamatkan diri ke bukit-bukit dan sekitar 6.000 orang pergi ke Timor Barat.

Liquiçá (Kodim 1638)

- Dandim: Letnan Kolonel Asep Kuswadi
- Bupati: Leoneto Martins
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova; Mayor (Pol.) Drs Joko Irianto
- Milisi: Besi Merah Putih (BMP), Pana
- Jumlah yang dibunuh: 183 orang

Kabupaten Liquiçá merupakan satu pusat kekerasan milisi dan TNI yang terkenal selama 1999.* Sebanyak 183 orang sipil dilaporkan terbunuh selama tahun itu, yang bagian terbesarnya adalah pendukung atau pemimpin kemerdekaan, berikut sanak saudara mereka. Selain itu, sekitar 20.000 orang penduduk dipaksa meninggalkan rumahnya, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara, karena intimidasi dan kekerasan yang sistematis.

Milisi dan pihak berwenang

Kelompok milisi utama di kabupaten ini adalah BMP (Besi Merah Putih),[†] yang dibentuk pertama kali pada Januari 1999 di Kecamatan Maubara, dan kemudian mendirikan pos-pos komando di seluruh kabupaten. Pada Juni 1999, milisi ini diperkirakan berkekuatan 600 orang. Sebagian besar dari mereka dipersenjatai dengan apa yang disebut senjata “tradisional”, seperti parang dan pisau, tetapi sebagian membawa senjataapi termasuk senjata otomatis berkekuatan tinggi dengan jenis yang sama seperti yang digunakan oleh TNI.

Seperti milisi Aitarak di Dili, BMP tidak membatasi operasinya di satu kabupaten. Tampaknya dengan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang di tingkat kabupaten dan provinsi, milisi ini mengambil bagian dalam tindak kekerasan berat di Dili, termasuk penyerangan terhadap rumah Manuel Carrascalão pada April

* Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNTAET, UNMO-Liquiçá, “History of Liquiçá District Through 1999,” Desember 1999; UNTAET, DHRO-Liquiçá, “Narrative Report on Events in Liquiçá District During 1999”; dan UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., Dili, [tanpa tanggal].

[†] Kelompok milisi yang lebih kecil, dengan nama Pana, dibentuk di Desa Vatuboro, desa asal Bupati Leoneto Martins.

yang mengakibatkan sedikitnya 12 orang meninggal. Anggota BMP juga bepergian sampai sejauh Oecussi, di mana mereka dilaporkan beroperasi bersama milisi Sakunar pada September 1999.

Walaupun di atas kertas dipimpin oleh Manuel Sousa, BMP dibentuk, dilatih, dan dikoordinasikan oleh jajaran tertinggi pihak berwenang militer dan sipil di tingkat kabupaten dan provinsi. Kelompok ini dibentuk awal 1999 setelah satu pertemuan yang diadakan oleh Bupati Liquiçá, Leoneto Martins. Sebagai anggota kehormatan Kopassus, Martins adalah pendukung utama BMP sepanjang 1999. Sebelum menjadi bupati pada 1995, Martins bertugas sebagai Camat Maubara, yang juga merupakan tempat desa asalnya. Mungkin bukan kebetulan jika pos-pos BMP yang pertama didirikan di kecamatan itu, yang juga menjadi basis utama kelompok milisi sepanjang 1999.

BMP, seperti milisi yang lain, juga mendapatkan dukungan kuat dari TNI dan Kopassus di tingkat kabupaten. BMP tumbuh dari kelompok Gadapaksi, yang dibentuk, didanai, dan dilatih oleh Kopassus sejak awal 1995. Dengan pembentukan BMP pada awal 1999, banyak dari sekitar 200 anggota Gadapaksi di Liquiçá pindah ke kelompok baru ini. Sama halnya, dukungan TNI dan Kopassus berlanjut, walaupun dengan nama baru dan kekuatan yang diperbarui.

Ada bermacam jenis dukungan TNI dan Kopassus untuk BMP pada 1999, termasuk pernyataan dukungan di depan umum, penyediaan latihan militer, operasi bersama, dan pembiaran tindakan milisi yang melanggar hukum. Seperti yang sudah dibahas dalam Bab 7, dokumen-dokumen internal TNI menunjukkan bahwa penyediaan latihan militer dan bimbingan militer merupakan hal yang rutin, yang dilaksanakan dengan pengetahuan penuh komandan-komandan TNI. Salah satu dokumen semacam itu, dari Kodim Liquiçá, mengungkapkan bahwa Komandan Resor Militer Kolonel Tono Suratman mengunjungi Maubara pada 16 April 1999, untuk berbicara dan memberikan 'pengarahan' kepada sekelompok milisi BMP berjumlah 500 orang di markas Koramil di sana.'

Para perwira TNI secara rutin memimpin operasi militer gabungan dengan BMP, atau membiarkan BMP melancarkan operasi. Seperti yang digambarkan di bawah ini, beberapa perwira TNI berpangkat tinggi, termasuk personel Kopassus, berada di tempat kejadian ketika milisi BMP melakukan pembantaian sekitar 60 pengungsi di gereja di Liquiçá pada April 1999. Walaupun lebih sering dilaksanakan dalam periode pra-UNAMET, operasi gabungan seperti itu terus berlanjut dengan bentuk berbeda-beda sampai akhir tahun itu. Satu laporan UNTAET bertanggal 14 Desember 1999, menggambarkan situasi akhir Juni 1999:

“Pada tahap ini milisi jelas telah menguasai kota. Sekelompok besar laki-laki, bersenjata parang dan senjata rakitan menjadi pemandangan umum di seluruh kabupaten ini. Orang tidak

* Lihat: Perwira Seksi Intelijen Kodim 1638 kepada Kepala Seksi Intelijen Korem 164/WD, Dan Sektor B dan lain-lain, "Laporan Harian Seksi Intelijen Dim 1638/Lqs Periode tgl. 16 s/d 17 April 1999," 18 April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #11).

jarang bertemu kelompok-kelompok milisi, disertai TNI, bergerak memasuki desa-desa dan membakar rumah di siang hari.”

Selain memberikan dukungan pelatihan dan operasional, para perwira TNI secara efektif terintegrasi dalam kepemimpinan dan struktur komando BMP. Komandan BMP yang terkenal adalah Sersan TNI Tome Diogo, seorang Timor-Leste yang telah bertugas di TNI selama bertahun-tahun, memiliki reputasi yang menakutkan di kabupaten ini, dan juga seorang petugas intelijen.[†] Komandan Rayon Militer (Danramil) Maubara, pusat operasi BMP, adalah seorang bintara Kopassus, Sersan Mayor Carlos Amaral.[‡]

Arti penting hubungan TNI dengan milisi juga terlihat dari sebaran geografis pos komando utama BMP di kabupaten ini. Salah satu pos pertama dibangun di Desa Vatuboro, tempat Batalion 143 bermarkas.[§] Tiga pos komando BMP lainnya dibangun di Desa Vaviquinia, Dato, dan Fatumasi, tempat berada markas Komando Rayon Militer. Pos kelima dibangun di Desa Maumeta, di Kecamatan Bazartete, yang merupakan lokasi markas Kopassus.[¶]

Akhirnya, BMP mendapat dukungan tidak resmi dari pihak berwenang Polri di tingkat kabupaten. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, Polri di Liquiçá selalu menutup mata terhadap kegiatan milisi, termasuk tindak kekerasan yang serius. Dalam beberapa kasus, seperti pembantaian di Gereja Liquiçá, perwira dan pasukan Polri memainkan peran mendukung secara langsung. Sekutu BMP yang paling jelas adalah Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova, yang menjabat sebagai Kapolres Liquiçá sampai dengan Juli 1999. Penggantinya, Mayor (Pol.) Joko Irianto, tidak begitu aktif mendukung milisi.

Singkatnya, para pejabat penting yang terlibat di dalam mengorganisasikan dan mendukung BMP mencakup, setidaknya: Bupati Liquiçá, Leoneto Martins; Komandan ‘Satgas Tribuana’ Kopassus, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat; Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Asep Kuswadi; Kepala Staf Kodim Kapten Purwanto; petugas intelijen Kodim Sersan Tome Diogo; Komandan Rayon Militer Maubara, Sersan Mayor Carlos Amaral; dan Kapolres, Letnan Kolonel Adios Salova.

* UNTAET, UNMO-Liquiçá, “History of Liquiçá District Through 1999,” Desember 1999.

† Menurut daftar yang disusun oleh Polisi Sipil UNTAET, Sersan Tome Diogo adalah satu dari 27 petugas intelijen di Kodim Liquiçá. Lihat UNTAET, “Roster of Troops: Kodim 1638 Liquiçá,” Liquiçá, [tanpa tanggal].

‡ Menurut daftar yang disusun oleh Polisi Sipil UNTAET, terdapat tujuh anggota SGI Kopassus di Maubara. Lihat UNTAET, “Roster of Troops: Kodim 1638 Liquiçá,” Liquiçá, [tanpa tanggal].

§ Komandan kamp BMP di Vatuboro dan saudara laki-lakinya kerap terlihat di kompleks Batalion 143, dan berasa dikirimkan ke BMP setempat dari kamp Batalion 143.

¶ Kopassus juga memiliki pos di Dato (di kediaman resmi seorang pejabat pemerintah), di Maumete, dan di Lunturi.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Tindak kekerasan serius—termasuk pemukulan, pembakaran rumah, dan pembunuhan—sudah dimulai di Liquiçá sejak awal Januari 1999, yang memaksa ribuan penduduk meninggalkan rumah-rumah mereka. Desa-desanya yang dianggap bersimpati pada Falintil menanggung beban serangan-serangan ini. Misalnya, Desa Guico di Kecamatan Maubara diserang dalam empat kesempatan terpisah pada Januari dan Februari. Para pelaku serangan-serangan tersebut adalah milisi BMP dan prajurit Batalion 143 dan 144 yang bermarkas di Kaikassa dan Vatuboro yang berdekatan.

Kekerasan lebih meningkat lagi pada awal April, dan akibatnya ribuan orang mengungsi ke gunung-gunung atau ke gereja Katolik di Liquiçá Kota. Menurut beberapa perkiraan ada 6.000 orang pengungsi dalam negeri di kabupaten ini, dari penduduk yang seluruhnya hanya 50.000 orang. Sejumlah besar pengungsi ini berkumpul di tepian Loes, Kecamatan Maubara, suatu wilayah dengan kehadiran Falintil yang cukup kuat, dan karena itu dianggap relatif aman. Walaupun demikian, orang-orang di sana tetap rentan terhadap serangan, dan kekurangan akses untuk mendapat bahan makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan yang memadai.

Dalam keadaan seperti ini milisi BMP dan prajurit TNI mulai melancarkan serangan kekerasan yang terencana dengan baik terhadap para pengungsi dalam negeri itu. Serangan itu, yang mencapai puncaknya pada awal April 1999, mengungkap hubungan dekat antara BMP dengan pihak-pihak berwenang militer dan sipil.

Salah satu korban gelombang kekerasan ini, Ilidio dos Santos, dibunuh oleh milisi di dekat markas Komando Rayon Militer Liquiçá pada 5 April 1999.* Dos Santos hendak berlindung di sana, tetapi alih-alih menemukan perlindungan ia justru dikeroyok oleh enam orang milisi yang menyatakan keinginan mereka untuk membunuh dirinya. Ia berusaha melarikan diri tetapi segera tertangkap dan dibunuh dengan sebilah parang. Para perwira TNI dan SGI di pos Koramil dilaporkan tidak berusaha menghentikan pembunuhan terhadap dirinya.

Korban yang lain, Fernando da Costa, ditangkap pada 5 April dan dibunuh di dalam tahanan TNI dua hari kemudian.† Da Costa, seorang pendukung CNRT, ditahan di kota Liquiçá oleh sekelompok prajurit TNI, milisi BMP, dan polisi yang bergerak dari rumah ke rumah untuk mencari para pemimpin CNRT yang sudah dikenal. Ia dipukuli babak belur oleh para prajurit TNI di luar rumahnya. Ia kemudian dibawa ke kantor Polres Liquiçá. Di sana ia ditahan selama dua hari, dan selama itu pula dilaporkan bahwa dirinya dipukuli lebih lanjut oleh seorang prajurit TNI. Pada 7 April ia diangkut dari selnya menuju ke markas Koramil Liquiçá oleh para prajurit TNI. Dari sana ia dibawa ke markas Koramil Maubara, disertai Sersan TNI Tome Diogo dan pemimpin BMP, Zacharia Alves. Segera setelah sampai di sana, ia ditikam berulang kali dan dibunuh.

* Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf. 94-95.

† Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf 80-84.

Kejadian-kejadian kekerasan awal April ini berpuncak pada pembantaian sebanyak 60 orang di dalam Gereja Liquiçá pada 6 April 1999. Mereka yang dibunuh semula mencari perlindungan di gereja ini karena meningkatnya kekerasan milisi. Walaupun serangan tersebut terutama dilancarkan milisi BMP, para saksimata mengatakan bahwa pasukan TNI (termasuk Kopassus) dan Brimob mendukung milisi dan menembakkan senjata-senjata mereka selama serangan. Mereka yang diduga terlibat adalah prajurit dari 'Satgas Tribuana' Kopassus; Batalion 143; Komando Distrik Militer (Kodim) Liquiçá; Komando Rayon Militer (Koramil) Maubara; dan Brigade Mobil (Brimob) Polri.

Beberapa saksimata mengatakan bahwa perwira senior TNI dan pejabat sipil ada di sekitar tempat kejadian saat serangan terjadi. Mereka mencakup: Dandim, Letnan Kolonel Asep Kuswadi; Komandan Satgas Tribuana Kopassus, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat; Bupati, Leoneto Martins; dan Kapolres, Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova. Semua pejabat ini tidak mengambil tindakan berarti untuk mencegah serangan, menghentikannya ketika serangan dimulai, atau menyelidiki kejadian itu maupun membawa mereka yang diduga pelaku ke pengadilan. Sebetulnya ada bukti tidak langsung bahwa para pejabat ini sudah lebih dulu tahu akan adanya, dan bahkan mungkin merencanakan, serangan tersebut. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Gereja Liquiçá.)

Dalam hari-hari dan minggu-minggu setelah pembantaian tersebut, serangan terhadap para pendukung kemerdekaan menyebar ke seluruh Liquiçá. Setidaknya enam orang lagi dibunuh di tempat yang berbeda-beda di kabupaten ini selama April, sementara rumah-rumah dibakar dan dijarah. Di hadapan meningkatnya kekerasan, ribuan penduduk melarikan diri ke hutan di sekitar Loes, Hatuquesi, dan Dare. Sebagian juga pergi ke Dili dan sekitarnya, sehingga jumlah keseluruhan orang yang terusir dari rumahnya di kabupaten ini menjadi lebih daripada 10.000 orang. Di Dili, sekitar 150 orang pengungsi dalam negeri mencari perlindungan di rumah tokoh prokemerdekaan yang dihormati, Manuel Carrascalão. Kurang dari dua minggu kemudian, pada 17 April, para pengungsi di rumah tersebut juga diserang oleh milisi dan TNI, dan setidaknya 12 orang dibunuh. (Lihat studi kasus: Pembantaian di rumah Carrascalão.)

Kekerasan terbuka sedikit berkurang dengan datangnya UNAMET ke kabupaten ini pada akhir Juni, tetapi intimidasi sistematis terus berlanjut dan milisi BMP, yang sering membawa senjata, terus bebas berkeliaran di seluruh kabupaten ini. Perbedaan utamanya adalah bahwa sasaran milisi dan TNI sekarang mencakup staf UNAMET dan pekerja bantuan kemanusiaan. Staf lokal UNAMET khususnya berulang-kali diancam, dan kadang-kadang diserang oleh milisi BMP. Ada juga beberapa insiden di mana milisi mengarahkan senjata pada kendaraan dan personel PBB saat mereka melintas dengan truk atau minibus. Tidak ada tindakan yang diambil terhadap para pelaku, yang menunjukkan bahwa perilaku mereka diperbolehkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Keterlibatan pejabat-pejabat TNI dan Polri dalam pola intimidasi dan kekerasan semakin terang dengan adanya serangan terhadap satu rombongan

bantuan kemanusiaan pada 4 Juli. Rombongan itu, yang didampingi Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET, dan dikawal oleh Perwira Penghubung Militer UNAMET, berhenti di kota Liquiçá setelah membagikan bahan makanan dan obat-obatan kepada pengungsi dalam negeri di wilayah sekitar Loes. Segera setelah berhenti, rombongan itu diserang oleh sekelompok milisi BMP yang mengayun-ayunkan parang dan menembakkan senjata rakitan. Satu orang luka berat dalam serangan tersebut, dan mobil-mobil rombongan rusak berat. Petugas Polri dan TNI yang ada di sekitar tempat kejadian tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan serangan. Tidak adanya tindakan itu turut memengaruhi keputusan UNAMET untuk melakukan evakuasi darurat semua personelnya pada hari yang sama. Kecurigaan adanya keterlibatan pihak yang berwenang ditegaskan melalui kejadian-kejadian selanjutnya, yang paling mencolok adalah dengan dilakukannya penyelidikan yang samasekali tidak memadai dari Polri terhadap kejadian tersebut. (Lihat studi kasus: Serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan.)

Intimidasi dan kekerasan tingkat rendah semakin intensif selama periode kampanye pada Agustus dan terus berlanjut sampai hari pemungutan suara. Pada 8 Agustus, seorang pekerja UNAMET bernama Mariano da Costa ditahan dan dipukuli oleh milisi BMP yang mencurigainya sebagai anggota CNRT. Atas dasar perintah Sersan TNI Tome Diogo dan komandan BMP Zacharia Alves, ia dibawa pergi dan tidak pernah terlihat lagi. Anggota-anggota milisi kemudian melaporkan bahwa Mariano da Costa telah ditikam sampai mati.⁷ Juga pada Agustus, enam orang aktivis CNRT ditahan oleh Polri dan milisi ketika mereka memasuki Liquiçá. Mereka dipukuli dan disekap dalam tahanan selama enam hari “untuk melindungi diri mereka”.

Kekerasan dan intimidasi membuat CNRT hampir tidak mungkin berkampanye secara terbuka, dan juga menghambat para pengungsi dalam negeri kembali ke kampung halamannya. Tetapi terlepas dari masalah-masalah ini dan adanya ketakutan yang berdasar akan terjadinya kekerasan lebih lanjut, jumlah orang yang memilih pada 30 Agustus sangat besar; tempat pemungutan suara khusus didirikan di dekat salah satu tempat permukiman utama pengungsi dalam negeri untuk memastikan agar sebagian besar pengungsi dapat memberikan suara.

Seperti di kabupaten-kabupaten lain, hari pemungutan suara relatif tenang. Namun, ketegangan memuncak pada hari-hari setelah pemungutan suara dan, dengan diumumkankannya hasil pemungutan suara pada 4 September, kekerasan sistematispun dimulai. Dalam beberapa jam setelah pengumuman, rumah-rumah di kota Liquiçá mulai dibakari, suara senjataapi otomatis terdengar, dan milisi bersenjata mulai berkeliaran dengan bebas di kota-kota maupun desa-desa. Selama tiga minggu berikutnya, ribuan orang diangkut paksa dengan truk dan diseberangkan ke Timor Barat, dan orang-orang dalam jumlah yang tidak diketahui dibunuh. Satu laporan UNTAET pada Desember 1999 mencatat bahwa 77 jenazah ditemukan di kabupaten

.....
⁷ Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf 141-146.

ini, dan 61 lainnya sedang diselidiki.^{*} Pada awal 2003, jumlah pembunuhan yang dilaporkan di kabupaten itu mencapai angka 183.

Mereka yang meninggal mencakup tiga laki-laki, semuanya dicurigai sebagai pendukung CNRT, yang ditahan oleh prajurit TNI dan milisi BMP di Desa Metagou pada 3 September. Ketiga orang itu mengalami pemukulan parah dan kemudian dibunuh pada hari berikutnya, 4 September, segera setelah hasil pemungutan suara diumumkan.[†] Korban yang lain juga tiga laki-laki, semuanya diduga sebagai anggota CNRT, yang dengan sengaja dibunuh pada 7 September di Desa Buka Mera oleh tim gabungan TNI dan milisi BMP.[‡] Dalam setiap kasus, prajurit dan milisi pergi ke rumah korban dan menyebutkan nama mereka sebelum dibunuh.

Operasi untuk memindahkan penduduk secara paksa dilaporkan dimulai di Desa Fatumasi, Kecamatan Bazartete. Orang-orang diambil dari rumah mereka dan dibawa ke kompleks gereja di Liquiçá dan ke pantai di Dato. Dari sana, mereka dinaikkan ke sejumlah kapal yang menuju ke Timor Barat. Setelah pemindahan paksa terhadap penduduknya, Desa Fatumasi dibakar habis. Proses yang sama juga dilakukan di Mataulun, Ipelu, dan Liquiçá Kota. Pola pemindahan paksa dan penghancuran yang sama terjadi di Kecamatan Maubara. Bedanya penduduk di sana diangkut ke atas truk dan dipindahkan melalui jalan darat. Desa-desa di dataran tinggi kurang begitu terkena, mungkin karena sulit dijangkau, dan mungkin karena milisi dan TNI enggan masuk ke wilayah-wilayah yang sejak dulu dikontrol oleh pasukan Falintil.

Diperkirakan ada 20.000 orang yang dipindahkan secara paksa dari rumah mereka di Kabupaten Liquiçá dan sekitar 80% bangunan dirusak atau dihancurkan.[§] Dalam setiap kasus yang diketahui, operasi pemindahan dan perusakan dilaksanakan bersama oleh prajurit TNI, Polri, dan milisi BMP, dalam beberapa kasus dibantu oleh anggota-anggota Aitarak yang dikirim dari Dili. Singkatnya, pola umum kekerasan setelah pemungutan suara di Liquiçá memberikan bukti kuat bahwa serangan itu dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak-pihak berwenang TNI dan Polri.

* UNTAET, UNMO-Liquiçá, "History of Liquiçá District Through 1999," Desember 1999.

† Tiga orang yang dibunuh di Metagou adalah: Jacinto dos Santos, Pedro Alves, dan Francisco da Silva. Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf 148-157.

‡ Tiga orang yang dibunuh di Buka Mera adalah: Paulo Gonçalves, Guilherme Alves, dan Clementino Gonçalves. Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., paragraf 158-166.

§ Semua ini angka perkiraan. Data dari UNTAET-DHRO Liquiçá memperkirakan bahwa 25.000 orang diungsikan paksa, sementara laporan UNTAET pada Desember 1999 mengatakan bahwa sekitar sepertiga dari penduduk (yakni sekitar 18.000 orang) dipaksa pergi.

Salah satu kejadian yang paling membuka mata adalah serangan bersenjata terhadap staf UNAMET, ketika mereka berusaha keluar dari Liquiçá Kota pada 4 September. Saat meninggalkan kompleks PBB, konvoi itu tiba-tiba dihujani tembakan senjataapi tanpa henti dari sejumlah penyerang, termasuk sejumlah orang yang diidentifikasi sebagai petugas Polri dan TNI. Masing-masing dari enam mobil rata-rata ditembak 15 kali, dengan tembakan tunggal maupun tembakan otomatis. Seorang perwira Polisi Sipil PBB, Earl Candler, mengalami luka berat dalam serangan itu, karena dua tembakan di bagian perut dan satu di bawah lengan. Segera setelah serangan itu, para pemimpin milisi terlihat bersama perwira penghubung TNI dan Polri. Lebih jauh, para pemimpin milisi membawa radio dua arah dan terlihat mengoordinasikan kegiatan milisi. Ketika helikopter PBB datang untuk mengevakuasi perwira Polisi Sipil PBB yang terluka, petugas Polri dan TNI yang ada juga membiarkan milisi menembaki helikopter itu.

Milisi BMP dan TNI mulai meninggalkan Liquiçá sekitar 20 September. Ketika pasukan INTERFET tiba di sana pada 28 September, hanya ada sedikit anggota milisi yang tersisa, dan mereka berangkat pergi pada hari yang sama.

Manatuto (Kodim 1631)

- Dandim: Letnan Kolonel Sulastiyo;
Letnan Kolonel Gerson Ponto
- Bupati: Vidal Doutel Sarmiento
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Johan A. Sumampouw
- Milisi: Morok, Mahadomi
- Jumlah yang dibunuh: 32 orang

Setidaknya 32 orang, dan kemungkinan lebih banyak, dieksekusi sewenang-wenang di Manatuto pada 1999.* Seperti di kabupaten-kabupaten lain, sebagian besar korban adalah orang-orang yang diduga maupun mereka yang memang mendukung kemerdekaan. Sebagian besar dibunuh selama April-Mei, atau dalam masa segera setelah pemungutan suara pada 30 Agustus. Dalam periode pra-UNAMET, para pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia adalah prajurit TNI, sementara dalam masa setelah pemungutan suara, anggota milisi berperan sama pentingnya. Kabupaten Manatuto juga menderita kerusakan harta benda yang besar, penjarahan, dan pengungsian paksa di masa setelah pemungutan suara.

* Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNAMET, Civpol Manatuto, "Regional Report," 21 September, 1999; UNTAET, DHRO-Manatuto, "Report of the District Human Rights Officer for Manatuto covering the period 11-28 September 2000"; UNTAET, Manatuto District Civpol, "History of Manatuto District 1999," 26 Oktober, 2000; dan João Soares Reis Pequinho, "Situasi keamanan di Manatuto kota berubah drastis dari keadaan yang aman ke keadaan yang menyramkan," Dili, 16 Oktober 2002.

Milisi dan pihak berwenang

Dua kelompok milisi utama di Manatuto adalah Morok dan Mahadomi (Manatuto Hadomi Otonomi – Manatuto Cinta Otonomi). Morok adalah kelompok yang lebih lama, yang didirikan beberapa tahun sebelumnya. Dengan markas di Kecamatan Laclubar dan Kecamatan Soibada, yang terletak di bagian barat-tengah negeri, pada awal 1999 Morok dipimpin oleh anggota TNI Filomeno Lopes da Cruz. Setelah pembunuhan terhadap dirinya pada pertengahan April, yang diduga dilakukan oleh pasukan Falintil, kepemimpinan lapangan Morok diserahkan kepada Domingos Metan.^{*} Mahadomi adalah kelompok baru, yang dibentuk pada awal 1999 sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk ‘menyosialisasikan’ opsi otonomi. Berbasis di Kecamatan Manatuto, komandan lapangan utama Mahadomi adalah Aleixo de Carvalho dan Filomeno Barreto.

Terlepas dari perbedaan usia dan basis operasi, Morok dan Mahadomi bekerjasama erat selama 1999. Bahkan, menurut beberapa pengamat, kedua kelompok itu secara resmi melebur menjadi satu kesatuan dengan nama Mahadomi pada Mei 1999.

Pendukung utama milisi di Kabupaten Manatuto, dan secara resmi juga komandan umumnya, adalah Bupati Manatuto, Vidal Doutel Sarmiento. Saksi-saksi yang pernah menghadiri pertemuan resmi dengannya pada 1999 mengatakan bahwa Bupati sering menyatakan bahwa jika opsi otonomi tidak menang, Manatuto akan terbakar. Walaupun pejabat sipil, Bupati diketahui berhubungan dekat dengan TNI dan khususnya dengan Kopassus. Seperti sejumlah pejabat senior pemerintah sipil Timor-Leste lainnya, ia diangkat menjadi anggota kehormatan Kopassus. Ketika ketegangan meningkat setelah pemungutan suara, Sarmiento dilaporkan mengenakan seragam perwira Kopassus miliknya.

Mahadomi dan Morok juga mendapat dukungan dari hampir seluruh aparat militer dan sipil di tingkat kabupaten maupun tingkat propinsi. Dukungan itu diungkapkan secara terbuka dalam serangkaian upacara resmi pelantikan milisi, dan pembubaran CNRT, yang terjadi di seluruh kabupaten dalam Mei 1999.

Salah satu upacara semacam itu, diadakan di Manatuto Kota pada 8 Mei 1999 dipimpin oleh Bupati dan dihadiri oleh Komandan Distrik Militer Letnan Kolonel Sulastiyu, Komandan Resor Militer Kolonel Tono Suratman, dan sejumlah tokoh pro-otonomi dari Baucau, Dili, dan Lautém. Pembicara utama dalam upacara itu adalah duta besar keliling Indonesia untuk masalah Timor-Leste, Francisco Lopes da Cruz, yang kebetulan juga kakak laki-laki dari pemimpin milisi yang belum lama dibunuh, Filomeno Lopes da Cruz. Satu laporan rahasia intelijen militer bertanggal 12 Mei 1999, yang melaporkan kejadian tersebut, menyatakan bahwa sekitar 5.000 penduduk setempat hadir di sana.[†]

^{*} Sumber sumber yang lain mengatakan bahwa pemimpin Morok adalah Thomas de Aquino Kalla. Lihat “Lt. Col. Sulastiyu,” dalam *Masters of Terror*, <http://yayasanhak.minihub.org/mot/booktoc.htm>.

[†] Kodim 1631/Manatuto, Perwira Seksi Intelijen kepada Kasi Intel Korem 164/WD dan lain-lain. Laporan Harian Intelijen, 12 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #23).

Upacara serupa diadakan di Kecamatan Laclubar pada 17 Mei. Menurut laporan situasi dari Perwira Seksi Intelijen Kodim Manatuto kepada Kepala Seksi Intelijen Korem, upacara tersebut dihadiri oleh Komandan Distrik Militer, para perwira dan prajurit Batalion Infanteri 301/PKS, dan pasukan Brimob.^{*}

Selain dukungan pemerintah yang ditampilkan di hadapan umum seperti itu, milisi di Manatuto juga mendapat dukungan praktis dari para perwira dan prajurit TNI. Wajah publik untuk dukungan TNI kepada milisi adalah Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Sulastiyo. Namun dengan pemindahannya pada Juli atau Agustus 1999, peran itu diambil alih oleh penggantinya Letnan Kolonel Gerson Ponto.[†] Namun menurut banyak laporan, Letnan Kolonel Ponto bukan pendukung kuat milisi dan bisa jadi telah membantu membatasi kekerasan milisi selama masa jabatannya yang pendek.

Bagaimanapun, para Komandan Komando Distrik Militer tidak bertindak sendiri. Kesaksian dari seorang mantan anggota TNI di Manatuto memberikan petunjuk bahwa para perwira dan prajurit yang terkait dengan Kopassus dan intelijen militer berperan penting dalam menggalang dan melatih milisi di sana. Tokoh sentral Kopassus di kabupaten itu adalah Letnan Kolonel Nyus Rahasia, Wakil Komandan Sektor Tempur B, yang dilaporkan berada di Manatuto dari pertengahan Mei hingga pertengahan Juni untuk mengoordinasikan pelatihan bergaya militer bagi milisi.

Setidaknya empat perwira Kopassus lain menetap di kabupaten itu, melatih dan bekerjasama dengan para milisi di Manatuto pada 1999. Tiga di antaranya—yang hanya dikenali sebagai Wayan, Ipon, dan Agus—dilaporkan mengirim senjata ke kediaman Bupati pada 4 September 1999. Senjata-senjata tersebut selanjutnya dibagikan kepada para anggota milisi Mahadomi dan digunakan dalam pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pembunuhan sewenang-wenang dalam minggu-minggu berikutnya.

Pernyataan bahwa Kopassus dan para perwira intelijen berperan penting di Manatuto didukung oleh bukti-bukti dokumenter. Satu bukti penting berasal dari laporan intelijen militer bertanggal 20 Mei, seperti yang sudah disebutkan di muka. Laporan yang disusun oleh seorang Perwira Seksi Intelijen Kodim untuk Kepala Seksi Intelijen Korem, Mayor Bambang Wisnumurty, dan ditembuskan kepada Komandan Satgas Tribuana Kopassus, menyatakan secara eksplisit bahwa pada 17 Mei 1999 dua orang perwira senior TNI telah memberikan 'pengarahan' kepada para milisi di basis milisi Morok di Manatuto. Walaupun tidak disebutkan namanya, dua orang perwira yang dimaksud itu digambarkan sebagai "Komandan Sektor A" dan "Komandan Sub-Sektor Manatuto". Komandan Sektor A adalah Kolonel Sunarko, dan Komandan Sub-Sektor Manatuto kemungkinan adalah Letnan Kolonel Nyus Rahasia.

.....
^{*} Kodim 1631/Manatuto, Perwira Seksi Intelijen kepada Kasi Intel Korem 164/WD dan lain-lain. Laporan Harian Intelijen, 20 Mei 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #24).

[†] Menurut beberapa sumber, Letnan Kolonel Sulastiyo digantikan pada Juli 1999 oleh Letnan Kolonel Gerson Ponto (alias Lexi Herson Ponto). Sumber-sumber lain menyatakan bahwa Sulastiyo tetap sebagai Dandim sampai pertengahan Agustus 1999.

Orang-orang ini, keduanya perwira Kopassus, tergolong dalam perwira TNI dengan pangkat paling tinggi dan paling berkuasa di Timor-Leste. Kenyataan bahwa tindakan-tindakan mereka dilaporkan secara rutin, dan tanpa sensor, di dalam satu laporan intelijen kepada Kepala Seksi Intelijen Korem, menunjukkan bahwa mereka tidak dianggap sebagai 'oknum' dan bahwa tindakan mereka nyatanya sejalan dengan norma dan prosedur TNI.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Korban pertama yang jatuh di Kabupaten Manatuto pada 1999 bukanlah tokoh prokemerdekaan tetapi pemimpin milisi Morok, Filomeno Lopes da Cruz. Ia ditembak dan dibunuh pertengahan April, yang diduga dilakukan oleh pasukan Falintil, di Desa Seur Tulan, Kecamatan Laclubar. Pada hari-hari berikutnya, setidaknya tiga orang aktivis prokemerdekaan dibunuh oleh para prajurit TNI dan sebuah desa dibakar, tampaknya sebagai balasan atas pembunuhan Filomeno Lopes da Cruz.

Mereka yang dibunuh antara lain adalah Marcelino Soares dan Mateus. Kedua orang ini dilaporkan dibunuh pada malam 24 April oleh pasukan Rajawali dan prajurit-prajurit dari Koramil Laclubar di sekitar desa Orlalan. Menurut para saksi, kedua orang itu dipenggal kepalanya, dan potongan kepala mereka ditempatkan di atas kuburan darurat mereka. Pada malam yang sama prajurit Rajawali dan Koramil dilaporkan membakar Desa Manelima yang terletak di sebelahnya, dan membunuh seorang pemuda bernama Manuel Almeida, juga sebagai pembalasan atas kematian pemimpin milisi Filomeno Lopes da Cruz. Manuel Almeida sudah lama bekerja sebagai pengemudi untuk seorang pastor Katolik di Soibada, Padre Julio, tetapi rupanya prajurit TNI mencurigainya terlibat dalam pembunuhan Filomeno.

Setidaknya satu pembunuhan lain dan sejumlah kejadian penganiayaan berat atau penyiksaan dilaporkan terjadi pada pertengahan Mei. Kali ini pelaku utamanya adalah anggota-anggota milisi Morok dan Mahadomi, walaupun jelas mereka bertindak sepersetujuan pihak berwenang sipil dan militer yang paling tinggi. Misalnya, pada 13 Mei milisi menangkap dua orang (João da Costa dan Paulino Soares) dan membawa mereka ke tempat tinggal Bupati, yang juga menjadi markas milisi dan tempat penahanan.^{*} Kedua orang laki-laki itu, yang dicurigai memasok makanan bagi Falintil, ditahan selama dua minggu, dan dipukuli babak belur sebelum Gereja Katolik dan Palang Merah Internasional turun tangan dan berhasil membuat mereka dibebaskan.

Pelecehan dan intimidasi oleh milisi terus berlanjut selama periode UNAMET. Pada pertengahan Agustus, milisi dan prajurit TNI berkeliaran di seluruh kota Manatuto dan menyobeki poster-poster CNRT. Pada 19 Agustus, lagi-lagi dengan bantuan prajurit, milisi menghancurkan kantor CNRT. Para pejabat UNAMET melayangkan beberapa protes resmi kepada Bupati dan para pejabat lain atas dukungan mereka kepada milisi, dan tentang iklim politik yang jelas tidak adil

* Satu penjelasan tentang kejadian ini menyatakan bahwa kedua orang itu diserahkan kepada SGI.

di kabupaten ini. Protes-protes itu tampaknya menahan bentuk-bentuk kekerasan yang paling ekstrem, namun tidak mengubah hubungan antara pihak berwenang dan milisi.

Dengan diumumkannya hasil pemungutan suara pada 4 September dan kepergian staf UNAMET beberapa hari kemudian, panggung untuk kekerasan terbukapun kembali digelar. Selama dua minggu selanjutnya, setidaknya 18 orang dibunuh, ribuan orang dipindahkan secara paksa dari rumah-rumah mereka, dan banyak infrastruktur fisik di kabupaten ini dihancurkan.*

Usaha-usaha oleh Gereja Katolik dan para pemimpin kedua belah pihak mengarah pada penundaan kekerasan, dan dengan begitu memberi kesempatan kepada penduduk untuk menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Dalam hari-hari segera setelah hasil pemungutan suara diumumkan misalnya, para pemimpin prokemerdekaan dan pro-otonomi tampak mencapai kesepakatan untuk menghindari tindakan-tindakan kekerasan. Menurut salah satu kesaksian, bahkan ada satu kesepakatan untuk membubarkan milisi, sebagai imbalan atas janji bahwa Falintil tidak akan menyerang.

Namun ada beberapa tokoh kunci yang memilih mengabaikan kesepakatan tersebut. Salah satunya adalah Bupati Vidal Doutel Sarmento, yang menolak memperbolehkan milisi dibubarkan, dan berperan sangat penting dalam membagikan senjata kepada milisi setelah 4 September. Seperti yang dikemukakan di atas, senjata-senjata tersebut dilaporkan dibawa ke rumah Sarmento oleh anggota-anggota Kopassus pada 4 September, lalu dibagikan kepada anggota-anggota milisi Mahadomi.

Pada 6 September, pembakaran dimulai di kota Manatuto. Menurut penduduk yang mengamati dari bukit-bukit di belakang kota, bangunan pertama yang dijadikan sasaran adalah rumah para pemimpin terkemuka CNRT, seperti Wakil Sekretaris Pertama CNRT Manatuto, Boaventura Soares. Dalam beberapa hari, hampir semua bangunan di dalam kota telah dibakar atau dihancurkan. Seperti yang terjadi di seluruh Timor-Leste, prajurit-prajurit TNI berperan aktif dalam pengorganisasian dan pelaksanaan pembakaran. Pada 7 September Perwira Penghubung Militer UNAMET di Manatuto menyaksikan secara langsung prajurit-prajurit TNI menyiram bangunan dengan minyak dan kemudian membakarnya.

Pembunuhan-pembunuhan terjadi segera sesudah itu. Di antara mereka yang dibunuh adalah Abilio Amaral, seorang mahasiswa dan pendukung kemerdekaan yang bekerja pada pemerintah Kabupaten Manatuto. Amaral dilaporkan dibunuh di dalam atau di dekat basis TNI di Desa Ailili di Kecamatan Manatuto, setelah ditahan oleh tentara pada 10 September. Dua orang saksi yang melihatnya di basis TNI setelah 10 September menyatakan bahwa wajahnya memar dan bengkak, tampaknya akibat pukulan. Pada

.....
* Parahnya pemindahan berbeda-beda di setiap kecamatan. Di Kecamatan Manatuto, hampir seluruh penduduk dipaksa pindah. Di Kecamatan Laclubar, sekitar setengahnya dipindahkan paksa, sementara di Soibada hanya sedikit yang dipaksa pergi dari rumahnya. Komunikasi pribadi dengan mantan staf UNAMET Manatuto, João Pequinho, Oktober 2002.

4 Oktober 1999 saksi lain melihat mayat tergeletak di belakang kamp TNI itu, dan meyakini bahwa itu adalah jenazah Abílio Amaral.[†] Pada September 2000, perwira Polisi Sipil UNTAET dilaporkan menemukan satu kuburan, dan mungkin lebih, di belakang barak TNI di wilayah yang sama.[‡]

Korban lain dalam kekerasan sesudah pemungutan suara adalah António (Pinto) Soares, seorang anggota kelompok pemuda klandestin, yang ditembak dan dibunuh oleh prajurit-prajurit dari Kodim Manatuto pada 11 September. Segera setelah hasil pemungutan suara diumumkan, Soares pergi ke bukit-bukit di luar Manatuto bersama istri dan seorang anak kecil. Dini hari 11 September ia kembali ke kota dengan sekelompok pemuda klandestin untuk mencari makanan bagi mereka yang bersembunyi di bukit-bukit. Saat kembali pada hari yang sama Soares dan dua orang lainnya (João Pequinho dan Marito Lay), semuanya membawa karung beras besar, disergap dari belakang oleh tiga prajurit Kodim Manatuto. António Soares dirobohkan dengan sebuah peluru di kepalanya.[‡]

Manatuto juga menderita akibat amukan anggota Batalion Infanteri 745 TNI, ketika mereka bergerak dalam konvoi dari basisnya di Lautém menuju Dili pada 20-21 September. (Lihat studi kasus: Amuk Batalion 745.) Dalam minggu-minggu pertama September anggota batalion itu membunuh setidaknya 21 orang. Beberapa dari pembunuhan ini terjadi di dekat Desa Laleia, di Kabupaten Manatuto.

Mereka yang meninggal mencakup tiga orang laki-laki, yang jelas tidak bersenjata, yang dibunuh dalam serangan di sisi timur jembatan Laleia, dan seorang laki-laki lagi, yang diduga pejuang Falintil, yang ditikam dan ditembak oleh prajurit yang kemudian memotong salah satu telinganya. Tiga orang lainnya, termasuk seorang perempuan, yang dilaporkan ditahan dekat Laleia, dipukuli kemudian diserahkan kepada prajurit di Kodim Manatuto. Mereka tidak pernah kelihatan lagi dan tampaknya mereka dibunuh.[§]

Manufahi (Kodim 1634)

- Dandim: Mayor Drs. H.M. Sinaga
- Bupati: Nazario José Tilman de Andrade
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rahim
- Milisi: Ablai
- Jumlah yang dibunuh: 27 orang

* UNTAET, Manatuto District Civpol, "History of Manatuto District 1999," 26 Oktober 2000.

† UNTAET, DHRO-Manatuto, "Report of the District Human Rights Officer for Manatuto covering the period 11-28 September 2000."

‡ João Soares Reis Pequinho, "Situasi keamanan di Manatuto kota berubah drastis dari keadaan yang aman ke keadaan yang menyeramkan," Dili, 16 Oktober 2002.

§ UNTAET, SCU, "Synopsis in Respect to TNI 745 Battalion and the Murder of Sander Thoenes," 9 September 2001.

Manufahi tidak banyak mengalami kekerasan dibandingkan kabupaten-kabupaten lain sepanjang tahun 1999, tetapi pelanggaran terhadap hak asasi manusia di sana tetap signifikan.* Setidaknya 27 orang dibunuh selama 1999, ribuan lainnya diungsikan paksa ke Timor Barat, dan ada kehancuran harta benda yang besar.

Milisi dan pihak berwenang

Para pelaku kekerasan di Manufahi terutama adalah anggota milisi setempat, Ablai, yang dibentuk Maret 1999. Akan tetapi, pasukan TNI bertanggung jawab langsung atas setidaknya tiga pembunuhan dan secara tidak langsung terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia yang lain. Sebagian besar dari mereka yang dibunuh adalah pendukung kemerdekaan, tetapi dua orang adalah milisi pro-totonomi. Semua pembunuhan yang diketahui, kecuali tiga, terjadi di Kecamatan Same, sementara sebagian besar wilayah kabupaten ini tidak mengalami jenis-jenis kekerasan yang hebat.

Kekerasan serius dilaporkan terjadi di Manufahi pada awal November 1998, beberapa waktu sebelum kekerasan dimulai di wilayah lain di Timor-Leste. Kekacauan dimulai di kecamatan Alas ketika pejuang Falintil membunuh tujuh orang prajurit TNI dalam rentang waktu dua minggu. Dalam satu operasi yang mendahului kekerasan selama 1999, pasukan TNI (termasuk unsur-unsur Batalion 744, Kodim, dan Koramil) bergabung dengan kekuatan milisi dan kesatuan-kesatuan pembantu untuk melancarkan serangan pembalasan yang besar terhadap orang-orang yang diduga pelaku, dan terhadap masyarakat yang dianggap mendukung mereka. Di masa awal operasi, sekitar dua lusin orang ditahan, sembilan orang dipukuli atau disiksa, dua orang dipukuli hingga mati, dan sekitar 1.000 penduduk mengungsi. Dalam minggu-minggu berikutnya, lebih daripada 13 orang diyakini telah dibunuh, semuanya dikenal sebagai orang perlawanan.

Kelompok-kelompok yang bergabung dengan TNI dalam operasi November 1998 adalah pendahulu dari Ablai, milisi yang dibentuk awal 1999. Banyak pemimpin kunci Ablai adalah anggota Gadapaksi, yang dibentuk 1995, atau anggota kesatuan bantuan angkatan darat yang sudah ada selama bertahun-tahun. Kesatuan bantuan ini biasanya dikenal sebagai 'Tentara Tiga Minggu,' suatu sebutan merujuk pada kenyataan bahwa anggota-anggotanya menjalani latihan selama tiga minggu yang dipimpin oleh Kopassus di basis Batalion 744 di Aileu pada 1995.

Seperti milisi-milisi lain di Timor-Leste, Ablai memiliki hubungan dekat dengan pihak berwenang militer dan sipil. Lapisan atas pimpinan Ablai memiliki hubungan yang sudah lama dengan Kopassus serta kesatuan-kesatuan dan perwira-perwira TNI yang lain. Komandan Ablai, Nazario Corte Real, misalnya, telah bekerja untuk Kopassus selama bertahun-tahun, dan telah menjalani latihan 'Tentara Tiga Minggu' pada 1995. Orang kedua dalam komando Ablai, Francisco Capella Ferrao,

* Kecuali disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNTAET, DHRO-Manufahi, "Manufahi," Juni 2002; UNTAET, DHRO-Manufahi, "Manufahi Human Rights Events Timeline," Februari 2001; dan UNTAET, DHRO-Manufahi, "The Situation in Turiscai," Februari 2001.

bahkan lebih lama bekerja dengan TNI, menurut beberapa keterangan sejak akhir dasawarsa 1970-an.

Pada 1999, penghubung utama Ablai dan Kopassus adalah seorang anggota milisi (yang mungkin juga seorang personel Kopassus) bernama Nelson de Araújo. Selain keterlibatannya dalam sejumlah tindak kekerasan tahun 1999, de Araújo dituduh terlibat dalam pembunuhan terhadap seorang penjaga perdamaian asal Nepal di Suai pada Agustus 2000.⁷ Tokoh kunci di pihak TNI adalah Komandan Komando Rayon Militer (Danramil) di Alas, António Pereira.

Ablai juga memiliki hubungan dengan milisi di wilayah lain Timor-Leste, dan melalui mereka memiliki hubungan pula dengan para pejabat militer. Upacara peresmian Ablai diselenggarakan pada Maret 1999 di Same, dengan dihadiri oleh pemimpin terkenal Aitarak (dan sebelumnya Gadapaksi) Eurico Guterres, yang dikenal punya hubungan dekat dengan pimpinan militer.

Ablai juga mendapatkan dukungan aktif dari beberapa pejabat sipil setempat, termasuk Mattius da Silva, Kepala Desa Taitudak, dan Baltazar Doutel Sarmento, Kepala Desa Mahaquidan, keduanya terletak di Kecamatan Alas. Tetapi hubungan antara Ablai dan pihak yang berwenang bukanlah sesuatu yang tanpa masalah. Khususnya, ada tanda-tanda perselisihan antara Bupati, Nazario Jose Tilman de Andrade, di satu pihak dengan kepemimpinan Ablai di pihak lain.

Walaupun bekerja untuk pemerintah Indonesia, de Andrade dianggap moderat, atau bahkan prokemerdekaan, dan menentang penggunaan kekerasan oleh milisi. Menurut beberapa keterangan, para komandan Ablai ingin membunuh dia dan pemimpin BRTT Jaime da Costa; dan hampir pasti bahwa ketua FPDK menyembunyikan seorang pemimpin Fretilin, dan dengan begitu menyelamatkan nyawanya. Apapun sebabnya, perselisihan itu tampak telah membatasi kekuatan dan keleluasaan Ablai untuk beroperasi. Hal ini mungkin membantu menjelaskan mengapa kekerasan selama 1999 relatif kurang serius di Manufahi dibandingkan sejumlah kabupaten yang lain. Campurtangan pejabat-pejabat setempat lainnya, seperti Camat Same, Filomeno Tilman, mungkin juga telah membantu membatasi kekerasan.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Kekerasan di Manufahi muncul dalam dua gelombang berbeda yang terjadi di tempat-tempat yang berbeda di dalam kabupaten ini. Gelombang pertama pada April 1999 terjadi di wilayah Orema. Gelombang kedua pada September terpusat di wilayah Datino dan Betano.

Pelanggaran berat yang pertama pada 1999 terjadi pada 21 Februari ketika tiga orang hilang setelah dibawa ke sebuah pos TNI di dekat pasar di kota

.....
⁷ Pada Maret 2003, para penyelidik Kejahatan Berat hanya sedikit menemukan bukti untuk mendukung tuduhan-tuduhan ini dan melepaskan Nelson de Araújo dari tahanan. Namun kegagalan untuk menemukan bukti bisa jadi berhubungan dengan fakta bahwa penyelidikan di Distrik Manufahi, sampai tanggal tersebut, amat sangat terbatas.

Same. Ketegangan memuncak pada Maret khususnya setelah Eurico Guterres mengunjungi wilayah itu pada 11 Maret. Mulai saat itu, milisi dan perwira TNI serta beberapa pejabat sipil berulang kali memberikan ceramah pada pertemuan-pertemuan umum, dan mengeluarkan ancaman serta peringatan agar tidak memilih kemerdekaan. Ancaman umum yang disuarakan menjelang pemungutan suara adalah bahwa jika kemerdekaan menang, “darah akan mengalir dari barat sampai ke timur.”

Pada 10 April, seorang pemimpin mahasiswa ditahan oleh milisi Ablai dan dipukuli hingga babak-belur.^{*} Sekitar seminggu sesudahnya, dua orang milisi Ablai dari Orema dibunuh ketika berada di Dili. Sebab kematian mereka belum jelas, tetapi para pemimpin milisi di Manufahi menuduh pihak prokemerdekaan yang membunuh mereka. Jenazah mereka dikembalikan ke Same oleh TNI dan dikuburkan di makam TNI pada pertengahan April.

Pembunuhan dan pemakaman itu terjadi hanya beberapa hari sebelum Eurico Guterres berbicara di depan rapat umum pro-otonomi, di depan kantor Gubernur di Dili, dan mendesak yang hadir untuk melakukan tindakan terhadap para pendukung kemerdekaan. Pidato Guterres pada 17 April, diikuti tidak hanya oleh amuk kekerasan milisi di Dili, tetapi juga dengan meningkatnya kekerasan milisi di Manufahi. Rumah-rumah sebagian besar tokoh prokemerdekaan di Kabupaten Manufahi dibakar. Karena ketakutan, banyak penduduk yang lari menyelamatkan diri ke gereja di Same, ke bukit-bukit atau ke tempat yang relatif aman di Dili.

Setidaknya lima orang dibunuh dalam masa gelombang kekerasan pertama ini (17-25 April). Penduduk Orema, yang menjadi wilayah utama kegiatan milisi, juga melaporkan bahwa anggota Ablai memaksa mereka dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan ternak babi, kuda, dan orang-orang perempuan. Seorang laki-laki dilaporkan dibunuh ketika anak perempuannya menolak pergi dengan milisi. Setelah membunuhnya, milisi itu mengambil paksa perempuan itu. Perempuan itu lalu melaporkan bahwa dirinya dipaksa menjadi budak milisi, dan bahwa dirinya diperkosa oleh milisi.

Gelombang kekerasan kedua di Manufahi dimulai pada hari pemungutan suara, 30 Agustus, dan berlanjut selama hampir tiga minggu. Selama masa ini, setidaknya 15 orang dibunuh, dan ribuan lainnya dipindahkan dengan paksa. Kekerasan dimulai dengan penyiksaan, pembunuhan, dan pemenggalan kepala terhadap dua orang laki-laki pada 30 Agustus. Penggalan kepala dari dua orang tersebut dipertontonkan di hadapan umum, dengan maksud jelas untuk menyebar teror agar orang pergi ke Timor Barat.

Taktik itu, bersama dengan pembakaran rumah-rumah dan bangunan-bangunan umum secara sistematis oleh pasukan-pasukan milisi, Polri, dan TNI (termasuk Batalion 301), membuat banyak penduduk desa meninggalkan rumah mereka. Polanya agak berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lain, tetapi ada pola umum

* Sebagian keterangan menyebutkan bahwa ia dibacok dengan parang.

di seluruh kabupaten ini yakni bahwa penghancuran paling buruk, dan jumlah pengungsian paling besar, terjadi di sepanjang jalan besar yang menghubungkan kabupaten ini dengan perbatasan. Desa-desa yang paling terpencil di kabupaten ini tidak mengalami kerusakan yang besar, karena milisi tidak mau bersusah-payah pergi ke sana, atau karena desa-desa itu merupakan basis Falintil.

Kekerasan itu diakhiri dengan sebuah pembunuhan penutup. Di dekat Betano, sesaat sebelum berangkat dari Manufahi, milisi Ablai membunuh lebih daripada sepuluh orang dalam satu hari, 24 September. Saat pasukan INTERFET tiba, milisi telah pergi, demikian juga TNI, Polri, dan kebanyakan pejabat pemerintah sipil.

Oecussi (Kodim 1639)

- Dandim: Letnan Kolonel Kamiso Miran;
Letnan Kolonel Bambang Sungesti
- Bupati: Filomeno Misquito da Costa
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Wilmar Marpaung
- Milisi: Sakunar
- Jumlah yang dibunuh: 170 orang

Kabupaten Oecussi termasuk yang paling banyak mengalami pelanggaran hak asasi manusia dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Timor-Leste sepanjang 1999.* Setidaknya 170 orang dibunuh selama tahun itu, dan sebagian besar pembunuhan terjadi pada minggu-minggu setelah pemungutan suara. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, ribuan orang meninggalkan rumah mereka dalam periode ini karena intimidasi dan kekerasan yang sistematis.

Milisi dan pihak berwenang

Kekuatan utama milisi di Kabupaten Oecussi, Sakunar, dibentuk dan didukung kuat oleh TNI, Polri, dan pihak berwenang sipil. Sakunar dibentuk pada April 1999 dengan dukungan penuh dari Gubernur Timor Timur Abílio Osório Soares, Bupati Dili Domingos Soares, dan dua komandan utama milisi di Timor-Leste, João Tavares dan Eurico Guterres.

Mulai dari saat dibentuk, Sakunar mendapatkan dukungan politik dan finansial dari Bupati Oecussi, Filomeno Misquito da Costa; Kapolres Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Wilmar Marpaung; dan yang paling penting, Dandim (sampai Agustus 1999) Letnan Kolonel Kamiso Miran dan penggantinya, Letnan Kolonel Bambang Sungesti.† Semua pejabat ini menghadiri upacara peresmian Sakunar pada 1 Mei 1999, yang

* Kecuali disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNTAET, DHRO-Oecussi, "Report on Human Rights Violations During 1999: Oecussi District," November 2001; UNTAET, General Prosecutor, Indictment of Simao Lopes et al. (Kasus No. OE-12-99-SC), Dili, September 2001.

† Letnan Kolonel Sungesti menggantikan Letnan Kolonel Kamiso Miran pada 9 Agustus 1999.

dalam kesempatan ini para pendukung kemerdekaan diancam dan dipukuli di hadapan umum oleh milisi.

Hubungan Sakunar dengan pihak berwenang resmi tidak berhenti di sana. Dalam kesaksian di hadapan pengadilan di Jakarta pada April 2000, seorang mantan pemimpin Sakunar mengatakan bahwa ia telah menerima senjata dari dua orang perwira senior Kopassus, yang ia kenal sebagai “Bambang” dan “Tatang”.^{*} Walaupun pengadilan tidak berusaha mengklarifikasi identitas para perwira itu, ada kemungkinan bahwa mereka adalah Mayor Bambang Wisnumurty, Kepala Seksi Intelijen Korem, dan Kolonel Tatang Zaenuddin, Komandan Sektor Tempur B. Kedua orang ini terlibat dalam penggalangan dan koordinasi milisi di tempat-tempat lain di Timor-Leste.

Para organisator dan pemimpin utama Sakunar, dan pemicu utama kekerasan masa sesudah pemungutan suara, adalah personel aktif militer dan Polri serta pegawai negeri sipil. Mereka adalah Danramil Passabe, Anton(io) Sabraka; Babinsa dan pelatih militer di Desa Passabe, Sersan Andre Ulan; pegawai negeri dan komandan umum Sakunar, Simão Lopes; Kepala Desa Passabe dan anggota Polri, Gabriel Colo; dan Kepala Desa Cunha, Laurentino Soares (alias Moko).

Jaringan hubungan resmi ini, dan keanggotaan rangkap antara milisi dan badan-badan negara, memudahkan Sakunar beroperasi dengan kekebalan hukum, dan memastikan bahwa anggota-anggotanya memiliki sarana operasional dan logistik untuk melakukan pelanggaran sistematis hak asasi manusia.

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Setidaknya 12 dan mungkin lebih banyak lagi orang dibunuh di Oecussi dalam periode pra-pemungutan suara, dan sejumlah kejadian serangan fisik, intimidasi, serta penghancuran harta benda dilaporkan terjadi. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, para pemimpin dan aktivis CNRT menjadi sasaran tindakan-tindakan intimidasi dan kekerasan oleh kekuatan pro-otonomi, dan mereka termasuk di antara korban yang meninggal.[†] Namun bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, Oecussi bukanlah pusat kegiatan militer atau milisi yang utama dalam periode pra-UNAMET dan periode UNAMET.

Keadaan itu berubah secara dramatis pada hari-hari akhir sebelum pemungutan suara dan dalam periode segera setelah pemungutan suara, khususnya setelah kepergian personel UNAMET dan pengamat internasional lainnya pada awal September 1999. Dalam beberapa minggu berikutnya lebih daripada 150 orang sipil dibunuh, sebagian dengan cara sangat mengerikan, dan membuat jumlah keseluruhan orang yang dibunuh di sana selama 1999 sedikitnya 170 orang. Selain itu, ribuan orang meninggalkan rumah mereka karena intimidasi dan kekerasan sistematis.

^{*} Pemimpin milisi itu adalah Laurentino Moko. Karen Polglaze, “Timor militia leader back in court,” AAP, 10 April 2000.

[†] Pada satu upacara umum di awal Mei, para pemimpin CNRT dipaksa untuk “secara sukarela” membubarkan organisasinya, dan menarik dukungan mereka pada kemerdekaan.

Apa yang disebut sebagai pembantaian Passabe pada September 1999 adalah yang paling sistematis dari semua tindakan kekerasan yang dilakukan dalam periode sesudah pemungutan suara di Timor-Leste. Dalam waktu tiga hari, mulai dari 8 hingga 10 September setidaknya 82 orang dibunuh. Semua korban adalah penduduk dari empat desa di Kecamatan Oesilo, bagian tenggara kabupaten ini. Sedikitnya 12 orang lainnya dibunuh bersama-sama di Desa Maquelab, di pantai utara, pada Oktober. Hampir semua desa yang dijadikan sasaran diketahui sebagai basis prokemerdakaan, dan para korban sebagian besar adalah pemimpin atau pendukung kemerdekaan. (Lihat studi kasus: Pembantaian di Passabe dan Maquelab.)

Jumlah korban yang sangat besar dan sifat sistematis dari pembunuhan di Passabe dan Maquelab tampaknya dapat dikaitkan dengan tiga faktor utama. Pertama, seperti yang sudah dikemukakan, kekuatan milisi didukung kuat oleh semua pejabat sipil, militer, dan kepolisian di Kabupaten Oecussi.

Faktor kedua adalah kepergian lebih awal UNAMET dan personel internasional lainnya, dan kehadiran pasukan multinasional yang relatif lambat. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, personel UNAMET mendapatkan ancaman pada hari-hari awal September, yang membuat diambilnya keputusan untuk melakukan evakuasi ke Dili. Ini membuat Oecussi sepenuhnya tanpa pengamat internasional, suatu keadaan yang memungkinkan TNI, Polri, dan milisi Sakunar bebas bertindak dengan impunitas penuh. Pasukan INTERFET mulai datang di Dili pada 20 September dan ditempatkan ke kabupaten-kabupaten lain pada hari-hari berikutnya, tetapi mereka belum tiba di Oecussi sampai 22 Oktober, dan sekitar waktu itu puluhan penduduk sipil telah dibunuh.

Faktor ketiga yang terkait adalah kedekatan Kabupaten Oecussi dengan wilayah Indonesia, dan letaknya yang terkucil dari wilayah Timor-Leste yang lain. Sebagai kantong yang dikelilingi dari arah timur, barat, dan selatan oleh Timor Barat Indonesia, dan dibatasi oleh laut di utara, kabupaten ini pada dasarnya terpisah dari wilayah Timor-Leste yang lain. Posisi geografisnya berarti bahwa kekuatan TNI dan milisi dapat bergerak dengan mudah melintasi perbatasan masuk Indonesia, seperti yang mereka lakukan ketika berlangsungnya pembantaian Passabe.

Viqueque (Kodim 1630)

- Dandim: Letnan Kolonel Djoko Sukarsono;
Letnan Kolonel Gustaf Hero
- Bupati: Martinho Fernandes
- Kapolres: Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rahman
- Milisi: Makikit, 59/75 Junior
- Jumlah yang dibunuh: 8-30 orang

Kabupaten Viqueque mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang lebih rendah dibandingkan sebagian besar kabupaten lain, tetapi tidak sepenuhnya terlepas

dari kekerasan.* Paling tidak delapan orang, tetapi mungkin sebanyak 30 orang, dibunuh pada 1999, dan diperkirakan 10.000 orang dipindahkan secara paksa dari rumah-rumah mereka. Berkebalikan dari pola di tempat-tempat lain di Timor-Leste, sebagian besar pembunuhan di Viqueque terjadi sebelum pemungutan suara. Penghancuran fisik sangat berbeda-beda di dalam kabupaten ini. Di beberapa wilayah, 90% bangunan dihancurkan, sementara di wilayah lain hampir tidak ada penghancuran samasekali.

Milisi dan pihak berwenang

Dua kelompok milisi utama di Viqueque adalah Makikit dan 59/75 Junior. Bila dibandingkan dengan kelompok milisi di bagian barat, kedua milisi ini tidak begitu kuat. Di tiga dari lima kecamatan—Ossu, Uatolari, dan Uato Carbau—tidak ada milisi. Menurut satu perkiraan, di seluruh kabupaten ini pada pertengahan 1999 jumlah milisi kurang daripada 100 orang.

Kelemahan relatif milisi di Viqueque mungkin terkait dengan keberadaan Falintil yang kuat di sana, dan keengganan para camat maupun kepala desa dan warga biasa untuk menjadi milisi. Salah satu dari empat tempat pemusatan kekuatan Falintil adalah di Uai Mori yang terletak di perbatasan Viqueque, dan beberapa kecamatan dianggap sebagai basis Falintil. Juga ada beberapa indikasi bahwa sejumlah perwira TNI di Kabupaten Viqueque—dengan perkecualian perwira Kopassus dan Intelijen Militer—hanya memberikan dukungan terbatas kepada milisi, dan bahwa TNI dan Polri telah diinfiltrasi oleh pendukung kemerdekaan.† Dandim kedua, yaitu Letnan Kolonel Gustaf Hero, mengambil sikap moderat dalam masa setelah pemungutan suara.

Milisi Makikit khususnya aktif di Kecamatan Lacluta, yang sekaligus merupakan markasnya. Misalnya, pada Agustus milisi ini melaksanakan operasi terhadap pengungsi dalam negeri yang berusaha kembali ke rumah mereka di wilayah tersebut. Kelompok milisi 59/75 Junior—yang mengambil nama dari tahun pemberontakan melawan Portugis yang gagal di Viqueque (1959), dan tahun invasi Indonesia ke Timor-Leste (1975)—bermarkas di Desa Beobe, di kota Viqueque. Walaupun aktif dalam periode pra-UNAMET, namun di sebagian besar periode UNAMET milisi ini tidak menonjol. Pada pertengahan Agustus, milisi ini menjadi lebih agresif, mengintimidasi banyak penduduk setempat, dan menyerang kantor-kantor CNRT dan DSMPTT yang baru dibuka di kota Viqueque.

Menurut banyak keterangan, milisi Viqueque didukung kuat oleh Bupati Martinho Fernandes yang disebut-sebut pernah menjadi teman Prabowo Subianto, dan juga seorang anggota kehormatan Kopassus. Fernandes bahkan mengatakan kepada

* Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNTAET, DHRO-Viqueque, "Human Rights Violations: Viqueque District," [tanpa tanggal]; dan UNAMET, MLO-Viqueque, "Outline of Pro-Integration Militias in Viqueque Area," 6 Agustus 1999, dimuat dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

† Sampai dengan suatu hari pada Agustus, Dandim adalah Letnan Kolonel Djoko Soekarsono (alias Joko Suharsoyo). Ia digantikan oleh Letnan Kolonel Gustaf Hero.

delegasi pengamat internasional pada 1999 bahwa ia menganggap milisi adalah unsur yang sah dari perjuangan pro-otonomi, walaupun ada kenyataan bahwa mereka bersenjata. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, pendanaan untuk milisi disalurkan melalui kantor bupati.

Milisi juga mendapat pelatihan dan dukungan logistik dari TNI, khususnya Kopassus. Menurut Perwira Penghubung Militer UNAMET yang ditugaskan di kabupaten ini, sejumlah kecil prajurit Kopassus beroperasi dalam setiap unit milisi dan menjalankan fungsi komando dan kontrol, yang memungkinkan adanya koordinasi antarsub-unit dalam satu kelompok milisi dan dengan kelompok milisi yang lain. Unsur-unsur Kopassus juga dilaporkan secara rutin mengadakan latihan dengan milisi 59/75 Junior di basis milisi di Desa Beobe, Kecamatan Viqueque Kota. Laporan seorang Perwira Penghubung Militer UNAMET pada 5 Agustus 1999 menyimpulkan bahwa “59/75 Junior adalah instrumen penindasan politik yang didukung dan kemungkinan dikendalikan oleh Kopassus.”

Beberapa perwira TNI dalam struktur komando teritorial, khususnya Seksi Intelijen Kodim, juga terlibat langsung dalam mengoordinasi kegiatan milisi. Perwira yang paling terkemuka dan paling tinggi pangkatnya di antaranya: Kepala Seksi Intelijen Kodim, Letnan Yusuf Tandji; tiga bintangara staf Intelijen Kodim, Sersan Andreas Prawin, Sersan Abdul Mansyur, dan Sersan Gabriel Tahu; dan Danramil Lacluta, Sersan Mayor Nicodemus Y.Y. , yang telah bertugas selama tujuh tahun dalam pasukan Kopassus sebelum menjadi Danramil.

Selain pendanaan resmi dan pelatihan, ada bukti kuat bahwa milisi di Viqueque menerima senjata dari pihak berwenang militer Indonesia. Para Perwira Penghubung Militer UNAMET menyaksikan milisi di Viqueque memanggul berbagai jenis senjataapi modern, termasuk senapan otomatis SP-1, dan pistol. Bupati mengaku kepada para pengamat internasional (IFET) bahwa 59/75 Junior memiliki senjata. Seorang mantan anggota milisi 59/75 Junior mengatakan kepada para penyidik bahwa dua bintangara Intelijen Kodim yang namanya sudah disebut di muka (Sersan Gabriel Tahu dan Sersan Andreas Prawin) telah mengatur 12 kotak senjata untuk dikirim kepada milisi di Beobe pada 8 Maret 1999. Saksi yang lain mengatakan bahwa 60 pucuk senjata disimpan di markas Kodim di Dilor, dan dibagikan pada malam hari oleh Danramil, Sersan Mayor Nicodemus Y.Y.

Akhirnya, milisi di Viqueque juga mendapat dukungan tidak langsung dari Batalion 406, batalion tempur yang ditempatkan di kabupaten ini. Sementara hanya sedikit bukti langsung tentang hubungan Batalion 406 dan milisi, pada awal Agustus para Perwira Penghubung Militer UNAMET menyimpulkan bahwa kesatuan militer itu mungkin telah membangun hubungan “yang bersahabat” dengan mereka. Laporan

.....
* UNAMET, MLO-Viqueque, “Outline of Pro-Integration Militias in Viqueque Area,” 6 Agustus 1999. Aitarak dilaporkan memberikan bantuan pelatihan milisi di kawasan Dilor, dan para Perwira Penghubung Militer UNAMET yakin bahwa mungkin milisi itu melakukannya sebagai satu organisasi samaran bagi Kopassus/SGL.

itu menyimpulkan, “sangat tidak mungkin bahwa Komandan BTT 406 Letnan Kolonel Sony tidak mengetahui kegiatan 59/75 mengingat ia demikian menonjol dalam urusan-urusan setempat.”

Peristiwa utama Hak Asasi Manusia

Dalam bulan-bulan pertama 1999 hanya ada beberapa pelanggaran hak asasi manusia di Viqueque, tetapi pelanggaran mulai lebih sering terjadi dan lebih berat seiring dengan dimulainya perekrutan milisi pada Maret. Pada 20 Maret, setelah berkumpul di pos TNI di Dilor, Kecamatan Lacluta, milisi yang baru direkrut menyerang orang-orang di desa-desa sekitarnya, memukuli dan mengancam mereka yang dianggap mendukung kemerdekaan. Sekitar 160 orang ditahan sebentar di Koramil Dilor oleh TNI dan milisi Makikit, dan diperkirakan 500 orang dari wilayah tersebut meninggalkan rumah mereka karena ketakutan, dan mengungsi sampai 20 km jauhnya. Kekerasan semakin meningkat pada April, ketika milisi melancarkan operasi intimidasi terhadap orang-orang yang diduga tokoh prokemerdekaan di Kecamatan Lacluta dan Kecamatan Viqueque. Dalam satu insiden di Kecamatan Viqueque, pada 18 April, milisi 59/75 menculik 18 pemuda yang mereka curigai mendukung Falintil.

Namun, kekerasan paling buruk terjadi pada Mei. Menurut seorang mantan anggota milisi, setidaknya 14 orang dibunuh oleh milisi dalam dua kejadian terpisah, yaitu pada 2 Mei dan 13 Mei, dan jenazah mereka dikuburkan di perkuburan Beobe, Viqueque Kota. Penyelidik-penyelidik PBB kemudian menemukan sebanyak 18 makam di perkuburan tersebut, yang mereka yakini berisi tubuh dari orang-orang yang dibunuh pada Mei 1999. Pemeriksaan terhadap jenazah mereka mengungkap bahwa sebagian telah dibunuh dengan cara yang luarbiasa dan mengerikan—sebatang tulang binatang ditusukkan ke langit-langit mulut hingga menembus otak para korban.

Pada 30 Mei, 13 orang laki-laki dari Lacluta ditahan dengan tuduhan membantu Falintil. Mereka kemudian dipukuli dengan pipa dan kayu panjang. Pemukulan tersebut dilaporkan dilakukan di markas Koramil, di bawah pengawasan Danramil Lacluta, Sersan Mayor Nicodemus Y.Y.

Kegiatan milisi berkurang secara berarti seiring dengan penempatan UNAMET dan para pengamat internasional pada Juni. Dalam masa tiga bulan berikutnya suasana relatif tenang. Perkecualian paling serius terhadap keadaan itu terjadi pada 10-11 Agustus di kota Viqueque. Pada 10 Agustus, Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur (DSMPTT) secara resmi membuka kantornya di kota ini. Senja harinya, sekelompok milisi tiba di kantor itu dengan mengendarai beberapa sepeda motor dan truk dan mulai menembakkan senjatanya ke arah bangunan itu; tidak kurang dari 14 lubang peluru kemudian ditemukan di atap. Pada hari yang sama, dua mahasiswa anggota CNRT dituduh mencuri sebuah sepeda motor dan ditahan oleh TNI.

Pada hari berikutnya, 11 Agustus, kantor CNRT dan kantor DSMPTT diserang oleh milisi bersenjata. Petugas TNI dan Polri tidak menghentikannya. Kenyataannya, ada

* UNAMET, MLO-Viqueque, “Outline of Pro-Integration Militias in Viqueque Area,” 6 Agustus 1999.

sejumlah saksi yang melihat beberapa prajurit TNI berjalan dengan tiga orang milisi di luar kantor DSMPTT. Kemudian pada hari yang sama sekelompok milisi bersenjata yang didukung oleh prajurit TNI, mengambil posisi di seberang sungai berhadapan dengan sekelompok mahasiswa. Anggota milisi (dan mungkin prajurit-prajurit TNI) menembakkan senjata, membunuh seorang mahasiswa. Dua orang pemuda dibunuh kemudian pada hari yang sama oleh milisi, dan tiga orang terluka.^{*}

Akibat dari kejadian-kejadian ini, sebagian besar anggota DSMPTT dan CNRT meninggalkan kota Viqueque; banyak penduduk di desa-desa yang berdekatan juga meninggalkan rumah mereka. Dalam dua minggu selanjutnya terjadi peningkatan intimidasi milisi di sejumlah kecamatan, dengan ancaman bahwa jika pro-otonomi kalah, akibatnya akan lebih buruk lagi. Menurut satu perkiraan, operasi teror itu mendorong sekitar 1.700 orang mengungsi pada akhir Agustus.

Walaupun ada ancaman-ancaman ini, dan serangan-serangan serius pada pertengahan Agustus, periode sesudah pemungutan suara di Viqueque hampir bebas dari kekerasan, dengan hanya ada dua orang yang dilaporkan terbunuh. Situasi yang unik ini mungkin berhubungan dengan kelemahan relatif milisi di kabupaten ini dan kuatnya Falintil. Sikap moderat Dandim yang baru, Letnan Kolonel Gustaf Hero, bisa jadi merupakan satu faktor. Dalam suatu pertemuan yang diadakan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara, Letnan Kolonel Gustaf Hero dilaporkan mengumpulkan kedua belah pihak dan meminta mereka menghormati hasil pemungutan suara dan tidak melakukan kekerasan. Ia juga mengatakan akan berusaha mencegah kekerasan di masa sesudah pemungutan suara. Walaupun demikian, pasukan milisi dan TNI melakukan penghancuran di beberapa wilayah, dan sebanyak 10.000 penduduk meninggalkan Kabupaten Viqueque karena ketakutan.

Studi kasus: Insiden utama Hak Asasi Manusia

Realitas kekerasan yang mengerikan pada 1999 hampir mustahil dipahami. Dalam satu laporan yang dikeluarkan segera setelah mengunjungi Timor-Leste di akhir 1999, Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor-Leste mengemukakan bahwa para anggotanya telah “dihadapkan pada kesaksian-kesaksian yang melampaui imajinasi mereka.”[†] Bab ini bertujuan memberikan pemahaman terbatas tentang kenyataan yang mengerikan tersebut, dengan mengungkapkan kembali secara terperinci lima belas insiden utama hak asasi manusia pada 1999.

^{*} Tiga orang yang meninggal diidentifikasi sebagai: Rogério Soares (alias Rogério Amaral), Carlos Sarmiento, dan Mariano Soares Pinto (alias Mariano Gusmão).

[†] United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, “Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary General,” Januari 2000, paragraf 34.

Beberapa kasus yang diperiksa di sini—seperti pembantaian di Gereja Liquiçá dan di Gereja Suai—relatif sudah diketahui dengan baik dan menjadi fokus proses hukum. Sementara kasus-kasus yang lain kurang diketahui, setidaknya di luar Timor-Leste. Kasus-kasus ini dimasukkan di sini karena kasus-kasus ini adalah bagian dari jalinan kekerasan dan penderitaan, dan seperti kasus-kasus lain yang terkenal, kasus-kasus ini memberikan pemahaman yang berharga mengenai pola umum kekerasan dan pertanggungjawaban yang dibahas di bagian lain dalam laporan ini.

Pembantaian di Gereja Liquiçá (6 April 1999)

Salah satu insiden kekerasan yang paling awal dan paling mengejutkan pada 1999 adalah pembantaian terhadap sebanyak 60 orang pengungsi di gereja Katolik di kota Liquiçá pada 6 April.^{*} Serangan itu juga memberikan beberapa bukti terkuat tentang hubungan erat antara milisi dan pihak berwenang militer dan sipil.

Pembantaian di Gereja Liquiçá terjadi dengan latar belakang meningkatnya kekerasan milisi di kabupaten ini. Pada hari-hari sebelum pembantaian, anggota-anggota milisi BMP, bersama dengan prajurit TNI dan Polri, telah menyerang dan menahan sejumlah pemimpin CNRT yang dikenal di Kecamatan Liquiçá dan Kecamatan Maubara, tempat BMP berbasis. Selama serangan-serangan itu terjadi, pada 4 dan 5 April, puluhan rumah dibakar dan sejumlah penduduk sipil dibunuh.

Karena ketakutan oleh kekerasan yang meningkat, penduduk Liquiçá dan Maubara mulai mengungsi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman, termasuk kompleks gereja Katolik. Suara tembakan senjata otomatis selama satu jam di siang hari pada 5 April, yang disusul kedatangan ratusan anggota milisi BMP, semakin mendesak mereka untuk pergi menyelamatkan diri. Menjelang petang, sekitar 2.000 orang, banyak dari mereka adalah perempuan dan anak-anak kecil, telah mengungsi di kompleks gereja. Beberapa berada di dalam gereja itu sementara yang lain berada di kediaman pastor setempat, Pastor Rafael dos Santos, yang bersebelahan dengan gereja.

Di luar kompleks gereja, para anggota milisi BMP dan prajurit TNI berkeliaran di jalan-jalan kota Liquiçá, untuk mencari para pemuda dan pemimpin prokemerdekaan. Beberapa anggota milisi dan prajurit tentara berkumpul di luar gereja dan menembak-nembakkan senjatanya ke udara, mengancam. Para pengungsi yang ketakutan untuk kembali ke rumah mereka memilih tinggal dan menginap di gereja.

^{*} Kecuali jika dinyatakan lain, penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut: KPP-HAM, "Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in East Timor" (internal), Jakarta, Januari 2000; Kesaksian Pastor Rafael dos Santos, direkam dan dikompilasi di Sydney, Australia pada tanggal 27-28 Oktober 1999; UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., Dili [tanpa tanggal]; dan Polda Timor Timur, Direktorat Reserse, "Laporan Penanganan Kasus Liquiçá" (No. R/355/IV/1999/Ditserse), Dili, 15 April 1999.

Pada pagi keesokan harinya, 6 April, para anggota milisi BMP yang bersenjatakan parang, pisau, tombak, dan berbagai macam senjataapi berkumpul di luar gereja. Yang juga hadir di tempat kejadian adalah pasukan TNI dari Kodim Liquiçá, Koramil Maubara, 'Satgas Tribuana' Kopassus, dan Batalion 143. Sepanjang pagi para anggota BMP dan beberapa prajurit mengejek dan mengancam para pengungsi, menyuruh mereka "menyerah". Menurut pastor paroki, Pastor Rafael, para anggota BMP mengancam pengungsi dengan mengatakan bahwa dua kelompok milisi lain (Mahidi dan Halilintar) akan bergabung dengan mereka pada pukul 10 pagi, dan mereka semua akan menyerang gereja. Selain melontarkan ancaman-ancaman, beberapa anggota milisi melempari dengan batu, yang mengakibatkan luka dan merusak kendaraan di halaman gereja. Beberapa anggota milisi juga menembakkan senjata rakitannya ke udara. Namun para prajurit TNI samasekali tidak turun tangan.

Sekitar 15 petugas polisi dari Polres Liquiçá dan satu peleton Brigade Mobil (Brimob) Dili juga ditugaskan di tempat kejadian, sepertinya untuk melindungi pengungsi. Namun beberapa jam sebelum serangan, para polisi terlihat berbincang-bincang akrab dengan para anggota milisi bersenjata, yang saat itu sudah berjumlah ratusan. Seperti prajurit-prajurit TNI, prajurit Brimob dan Polri ini tidak berusaha menangkap atau melucuti para anggota milisi, atau mencegah mereka mengancam orang-orang yang berada di dalam gereja.

Petugas Polri di tempat kejadian bukannya berusaha membubarkan milisi malah menuntut agar Pastor Rafael menyerahkan dua orang pemimpin prokemerdekaan—Kepala Desa Dato, Jacinto da Costa Pereira,^{*} dan seorang lelaki lain. Pastor Rafael menjelaskan bahwa satu orang yang diminta tidak ada di tempat, dan ia menolak menyerahkan Jacinto da Costa Pereira kepada Polisi karena ia takut Jacinto akan dibunuh. Pastor itu juga menolak pernyataan, yang dibuat oleh para petugas Brimob dan milisi, bahwa Jacinto da Costa Pereira membawa sepucuk senjata ke dalam gereja.

Tidak bertindaknya Polri dan TNI di tengah meningkatnya kekerasan milisi sebenarnya tidak mengejutkan. Seperangkat bukti penting mengarah pada kesimpulan bahwa berkumpulnya para milisi di Liquiçá, dan serangan terhadap pengungsi, merupakan bagian dari rencana yang terorganisasi dengan baik, yang digerakkan oleh para pejabat tinggi militer dan sipil. Saat kejadian berlangsung, Dandim Letnan Kolonel Asep Kuswadi dan Bupati Leoneto Martins, berkali-kali rapat dengan komandan-komandan penting TNI, Kopassus, Polri, dan BMP.

Dalam salah satu rapat tersebut, yang dipimpin oleh Dandim pada pagi hari 6 April, para prajurit TNI diperingatkan akan kemungkinan adanya serangan milisi terhadap para pengungsi dalam negeri, tetapi mereka tidak diberi perintah untuk mencegahnya, atau melindungi orang-orang yang berada di kompleks gereja. Dalam rapat lain pada hari yang sama, Bupati dan Komandan BMP, Manuel de Sousa, memberitahu para pemimpin milisi bahwa mereka harus mempersiapkan

.....
^{*} Laporan KPP-HAM menyebut namanya sebagai Jacinto da Costa Conceição.

diri untuk menyerang gereja dan siap membunuh setiap pengungsi yang berusaha melarikan diri.

Rapat terakhir di Kodim Liquiçá, yang diadakan sesaat sebelum serangan, dihadiri oleh para pemimpin sipil dan militer yang paling penting di tingkat kabupaten dan provinsi. Mereka antara lain adalah: Wakil Danrem Timor Timur, Kolonel Mudjiono; Komandan Satgas Tribuana VIII Kopassus, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat; Dandim Liquiçá, Letnan Kolonel Asep Kuswadi; Bupati, Leoneto Martins; dan Kepala Kepolisian Resor, Letnan Kolonel Adios Salova.

Segera setelah pertemuan tersebut berakhir, antara pukul 12 dan 1 siang, satu tembakan terdengar di sekitar gereja.^{*} Para prajurit Brimob dan milisi BMP mulai menembakkan senjata mereka ke arah kompleks, dan serangan dimulai. Milisi memimpin serangan, namun pasukan TNI dan Brimob berada dekat di belakangnya.[†] Sebagian besar saksimata mengatakan bahwa beberapa prajurit TNI dan Brimob bersiaga tanpa berbuat apa-apa dan membiarkan milisi menyerang, sementara yang lain aktif bergabung dengan milisi.

Dakwaan yang dikeluarkan dalam kasus ini oleh Penuntut Umum UNTAET menyatakan bahwa “anggota-anggota TNI melepaskan tembakan ke arah kerumunan orang dan dengan membabi-buta membunuh sejumlah orang.”[‡] Pastor Rafael dos Santos, pastor paroki Liquiçá, memberikan kesaksian di bawah ini mengenai awal terjadinya pembantaian:

“... Saya mendengar tembakan dari kelompok Besi Merah Putih (BMP) dan Brimob di depan rumah paroki. Mereka menembak ke udara. Setelah itu anggota-anggota Besi Merah Putih dan Kodim masuk dan mengepung orang-orang yang berada di dalam kompleks gereja. Mereka mulai menembak siapa saja. Orang-orang yang didapati di luar gedung Paroki dibacok sampai jatuh ... Anggota milisi didampingi oleh prajurit Kodim dan unsur-unsur Brimob. Mereka memasuki kediaman pastor dan mulai membunuh orang-orang dengan parang dan menembak orang-orang di dalam rumah. Pada saat itu masih ada perempuan, anak-anak, dan laki-laki di dalam kompleks. Mereka mulai membunuh yang laki-laki dulu karena mereka berada dekat pintu. Para laki-laki ini sebelumnya mendorong perempuan dan anak-anak ke belakang.”[§]

* Menurut satu sumber, tembakan itu ditujukan ke arah pasukan Brimob oleh seorang Babinsa TNI dari Fatumasi, sebagai provokasi yang sengaja dimaksudkan untuk memancing penyerangan.

† Tuduhan tentang keterlibatan langsung prajurit TNI di dalam penyerangan di Liquiçá mungkin dikonfirmasi lebih lanjut oleh satu memorandum kepada Jenderal Wiranto, dari Kepala Staf Kodam IX, Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon. Dalam memo tersebut, yang dilaporkan diserahkan sebagai bukti di dalam salah satu sidang pengadilan di Jakarta, Simbolon disebut telah menegaskan bahwa para prajurit Kopassus dan Kodim mendukung kekuatan pro-otonomi dan menembakkan senjata-senjata mereka selama berlangsungnya insiden tersebut. Lihat *Suara Timor Lorosae*, 11 September 2002.

‡ UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., Dili, [tanpa tanggal], paragraf 112.

§ Kesaksian Pastor Rafael dos Santos, direkam dan dikumpulkan di Sydney, Australia tanggal 27 Oktober 1999, halaman 8.

Pasukan Brimob membantu penyerangan dengan melemparkan gas air mata ke dalam rumah paroki, untuk memaksa pengungsi keluar dari tempat itu. Ketika mereka lari dari gereja, mereka dibacok dengan parang dan pisau, atau ditembak. Penjelasan Pastor Rafael selanjutnya:

“Saya melihat para anggota Brimob memecahkan jendela rumah paroki dan melempar gas air mata berkali-kali ke dalam rumah paroki, sampai orang-orang yang berlindung di dalamnya keluar karena mereka tidak tahan dengan rasa pedih di mata mereka. Saat orang-orang keluar dari rumah Paroki, milisi mulai membunuh laki-laki, tetapi mereka tidak membunuh perempuan dan anak-anak. Kaum perempuan dan anak-anak dibiarkan meninggalkan kompleks, sementara laki-laki dibacok sampai mati.”

Ketika sebagian besar pengungsi telah meninggalkan gereja dan rumah paroki, anggota-anggota BMP, Polri, dan prajurit TNI, termasuk Sersan TNI Tome Diogo, masuk mencari yang masih tersisa di dalam. Mereka yang ditemukan langsung dibunuh. Pastor Rafael menggambarkan kejadian ini:

“Setelah kami keluar dari rumah Paroki milisi Besi Merah Putih dan anggota Polres dan Kodim bergerak dari kamar ke kamar di dalam rumah Paroki menghancurkan barang-barang, mencari dan membunuh orang. Sejumlah pemimpin muda umat dari kaum prokemerdekaan Liquiçá berusaha bersembunyi di atap rumah. Milisi menarik turun atap rumah Paroki. Mereka menarik turun orang-orang muda itu dan membunuh mereka.”[†]

Kesaksian Pastor Rafael, dan khususnya pernyataannya bahwa tentara dan polisi bergabung dalam serangan tersebut, telah dikonfirmasi oleh saksi-saksi yang lain. Bersaksi di pengadilan terhadap Letnan Kolonel Asep Kuswadi, Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova, dan Leoneto Martins pada Juli 2002 di Jakarta, seseorang yang selamat dari pembantaian mengatakan bahwa dirinya melihat para prajurit tentara dan polisi berseragam menembakkan senjata ke dalam kompleks gereja: “Semua tembakan diarahkan ke gereja,” katanya, dan yang menembak “bukan hanya polisi tetapi juga tentara.”[‡]

* Kesaksian Pastor Rafael dos Santos, halaman 8.

† Kesaksian Pastor Rafael dos Santos, halaman 9.

‡ Antônio Conceição Santos, dikutip dalam AFP, “Survivor Says Soldiers, Police Fired Shots at Refugee-filled Timor Church,” 17 Juli 2002. Saksi yang lain, bersaksi di pengadilan di Jakarta terhadap Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Timbul Silaen, mengatakan di hadapan pengadilan, “Saya melihat tentara memasuki gereja dan mereka bersenjata.” Emilio Barreto, dikutip dalam Reuters, “Indonesian Soldiers Stormed Timor Church: Witness,” 31 Mei 2002.

Laporan resmi Polri tentang pembantaian di Gereja Liquiçá menyatakan bahwa hanya lima orang terbunuh dalam serangan tersebut.^{*} Penyelidikan independen menyatakan jumlah sebenarnya paling tidak 30, dan bisa jadi sebanyak 60 orang yang dibunuh.[†] Namun, jumlah korban secara pasti belum diketahui karena mayat mereka yang terbunuh dibawa pergi dan dilenyapkan segera setelah pembantaian. Dalam pernyataan kepada para penyelidik, para saksi menunjukkan bahwa puluhan mayat diangkut ke dalam truk oleh para prajurit TNI dan anggota milisi, dan dibuang atau dikubur di beberapa tempat.

Seorang saksi menyatakan, misalnya, bahwa dirinya dan enam orang laki-laki lainnya menerima perintah dari Danramil (Sersan Mayor Carlos Amaral) dan Camat Maubara (José Afat) untuk membantu menguburkan lima mayat.[‡] Menurut kesaksiannya, mayat-mayat itu dibawa ke Maubara dalam sebuah truk oleh para prajurit Kodim Liquiçá pada malam tanggal 6 April, dan dikuburkan kemudian pada malam yang sama, dekat rumah seorang anggota Koramil Maubara.[§] Kesaksian ini konsisten dengan satu laporan terpisah yang menyatakan bahwa sebuah truk yang mengangkut lima mayat dikemudikan dari Koramil Maubara ke pos BMP di jalan antara Liquiçá dan Maubara, dan bahwa para milisi di pos tersebut kemudian diperintahkan menggali lubang kubur yang berjarak 200 meter dari pos dan menguburkan mayat-mayat tersebut.[¶]

Saksi lain, seorang mantan anggota milisi BMP, mengatakan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia bahwa dirinya diperintahkan oleh seorang perwira TNI untuk membawa sebuah truk militer untuk mengangkut 15 mayat dari Liquiçá ke Danau Masin, satu rawa yang berada dekat jalan antara Liquiçá dan Maubara. Setelah membuang mayat-mayat itu, saksi berkata, ia diperintahkan

* Laporan tersebut disusun oleh Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Timor Timur, dan disampaikan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 15 April 1999. Laporan tersebut adalah: Polda Timor Timur, Direktorat Reserse, "Laporan Penanganan Kasus Liquiçá" (No. R/355/IV/1999/Ditserse), Dili, 15 April 1999.

† Satu laporan UNTAET dari bulan Desember menunjukkan bahwa Civpol memiliki satu daftar nama 61 orang yang diduga dibunuh dalam insiden ini, dan menyatakan bahwa "sudah diterima secara umum bahwa jumlah seluruhnya mungkin sekitar 50-60 orang." Lihat UNTAET, UNMO-Liquiçá, "History of Liquiçá District Through 1999," Desember 1999, halaman 3. Dalam laporannya pada Januari, KPP-HAM Indonesia menyimpulkan dengan lebih hati-hati bahwa "sedikitnya 30 orang" telah dibunuh. Satu surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum UNTAET menyatakan bahwa "lebih dari seratus orang dibunuh atau dilukai" dalam insiden ini. Pastor Rafael yakin bahwa lebih dari seratus orang yang meninggal.

‡ Dikutip dalam KPP-HAM, "Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in East Timor," (internal), Jakarta, Januari, 2000, halaman 17.

§ Para tentara yang diduga membawa mayat-mayat itu ke Maubara adalah Sersan Tome Diogo dan Sersan Jacob. KPP-HAM, "Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in East Timor," (internal) Jakarta, Januari 2000, halaman 17.

¶ Ini juga konsisten dengan kesaksian bahwa Sersan TNI Tome Diogo mengendarai sebuah truk yang mengangkut lima mayat ke rumah sakit di Liquiçá pada malam hari tanggal 6 April 1999, sebelum mengemudikan truk itu lagi dengan mayat-mayat yang masih berada di dalamnya. Lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment against Leoneto Martins et al., Dili, [tanpa tanggal], paragraf 120.

untuk kembali membawa truk tersebut ke Koramil Maubara.* Komnas HAM juga menemukan bahwa sejumlah mayat telah dilemparkan ke laut di wilayah Kecamatan Maubara, dengan menggunakan tujuh truk dan empat jip.†

Penghilangan mayat secara sistematis seperti yang digambarkan dalam kesaksian-kesaksian ini sepenuhnya sama dengan pola pembuangan mayat yang terjadi pada pembantaian di Gereja Suai pada 6 September, dan di kantor Kepolisian Resor Maliana pada 8 September. Bersama dengan bukti-bukti mendasar tentang keterlibatan TNI dan Polri dalam pembantaian itu sendiri, kehadiran para pejabat penting di tempat kejadian kejahatan, dan tanggung jawab para pejabat tersebut dalam membentuk dan mengoordinasikan BMP, bukti penghilangan mayat ini membuat nyaris pasti bahwa pembantaian di Gereja Liquiçá direncanakan oleh pihak-pihak berwenang TNI dan sipil tingkat tinggi.

Pembunuhan di Cailaco (12 April 1999)

Beberapa dari pelanggaran hak asasi manusia yang paling luarbiasa pada 1999 terjadi di Kabupaten Bobonaro, di mana paling tidak 229 penduduk sipil dibunuh dalam kekerasan politik, dan banyak lainnya menderita penyiksaan (termasuk pemerkosaan), pemukulan, penghancuran harta benda, dan pemindahan paksa. Semuanya kecuali sejumlah kecil korban adalah pendukung kemerdekaan. Para pelaku umumnya adalah anggota beberapa kelompok milisi yang beroperasi di kabupaten ini, tetapi dalam banyak kasus, pelaku utamanya adalah para perwira dan prajurit TNI.

Satu contoh yang paling jelas dari pola umum ini terjadi di Kecamatan Cailaco pada 12 April 1999.‡ Dalam dua kejadian terpisah pada hari yang sama, prajurit-prajurit TNI dan milisi menangkap dan dengan sengaja mengeksekusi tujuh orang. Mereka yang meninggal diidentifikasi sebagai: Carlito Mau Leto (32 tahun), Domingos Resi Mau (29 tahun), João Evangelista Lima Vidal (40 tahun), Paulino Soares (34 tahun), José Pau Lelo (37 tahun), António Soares (45 tahun), dan Manuel Maulelo Araújo.

Menurut satu surat dakwaan yang diajukan oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste untuk Kejahatan Berat,§ ketujuh pembunuhan ini dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan sejumlah pejabat senior militer dan sipil, termasuk di dalamnya: Komandan Distrik Militer (Dandim) Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Letnan Sutrisno; Bupati, Guilherme dos Santos; komandan

* KPP-HAM, "Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in East Timor," (internal) Jakarta, Januari 2000, halaman 18.

† KPP-HAM, "Report of the Indonesian Commission on Human Rights Violations in East Timor," (internal) Jakarta, Januari 2000.

‡ Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini berdasarkan pada UNTAET, DHRO-Bobonaro, "Bobonaro District 1999 report," September 2002.

§ Surat dakwaan diajukan pada 3 Februari 2003.

milisi, João Tavares; dan Ketua FPKD Kabupaten Bobonaro, Jorge Tavares. Surat dakwaan ini juga menyebut Letnan Sutrisno sebagai salah satu pelaku langsung dalam tujuh pembunuhan tersebut.

Menurut beberapa keterangan, pembunuhan Cailaco merupakan tindakan pembalasan terhadap pembunuhan tokoh pro-otonomi setempat, Manuel Gama, dan setidaknya seorang prajurit TNI, dalam sebuah penyerangan di dekat Desa Poegoa, Kecamatan Cailaco, pada pagi hari 12 April. Gama yang juga Kepala Keuangan pemerintah kabupaten dan belakangan diangkat menjadi wakil ketua FPKD di Maliana, sedang berkendara dari Cailaco ke Maliana dengan pengawasan beberapa prajurit TNI ketika serangan terjadi. Ia dan salah satu prajurit TNI ditembak dan dibunuh dalam jarak dekat, sementara seorang prajurit TNI lainnya dilaporkan selamat dari penyerangan.

Sampai dengan awal 2003, identitas para pembunuh Manuel Gama masih belum ditetapkan. Beberapa penduduk menyatakan bahwa serangan itu dilakukan oleh seorang anggota milisi Halilintar, sebagai satu dalih terencana untuk tindakan menghantam para pendukung kemerdekaan, yang kemudian menyusul. Sementara yang lain meyakini bahwa penyerangan dan pembunuhan tersebut merupakan kerja dari para pejuang Falintil, yang telah beroperasi di wilayah tersebut dalam beberapa bulan sebelumnya. Siapapun pelakunya, serangan itu memang menjadi pemicu sebuah operasi pembalasan, yang dalam operasi tersebut para penduduk setempat ditahan, dipukuli, dipindahkan dengan paksa, dan dibunuh oleh para prajurit TNI dan anggota milisi Halilintar.

Setelah mengetahui kematian Manuel Gama, komandan pos SGI di Marco, Mahalan Agus Salim, memerintahkan prajurit TNI dan milisi Halilintar untuk melacak pelakunya.^{*} Beberapa tim prajurit dan milisi kemudian menyebar ke desa-desa di wilayah sekitar tempat penyerangan, mencari tersangka pembunuh.[†] Sepanjang masa pembersihan awal ini sekitar 30 orang penduduk, termasuk perempuan dan anak-anak, ditahan dan dipaksa berbaris menuju markas Koramil di Marco. Perempuan dan anak-anak ditahan secara terpisah selama empat hari sebelum kemudian dibebaskan. Beberapa dari laki-laki yang ditahan—termasuk Carlito Mau Leto dan Domingos Resi Mau yang belakangan dibunuh—mengalami pemukulan yang parah selama dalam penahanan. Pemukulan dimulai setelah perintah diterima dari Kodim di Maliana dan dari komandan milisi João Tavares.[‡] Menurut surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat:

* East Timor, Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Cailaco Indictment, paragraf 44.

† Surat dakwaan Cailaco menggambarkan operasi tersebut sebagai berikut: "Pada tanggal 12 April 1999, para anggota TNI dan milisi Halilintar menyerang penduduk sipil di Kecamatan Cailaco yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan. Serangan ini merupakan bagian integral dari operasi kekerasan yang sedang berjalan terhadap penduduk sipil Timor Timur." Cailaco Indictment, paragraf 42.

‡ Cailaco Indictment, paragraf 46-50.

“Para tahanan diperintahkan untuk berbaring di lantai dan TNI dan anggota milisi yang hadir menghantam mereka dengan tinju dan sepatu bot. Mereka juga dipukuli dengan popor senapan ketika ditanyai tentang pembunuhan terhadap Manuel Gama.”

Sejumlah tahanan dibebaskan, tetapi beberapa tetap berada dalam penahanan di Marco. Dua lainnya—Carlito Mau Leto dan Domingos Resi Mau—dibawa ke tempat pembunuhan Manuel Gama, dekat Desa Poegoa. Para prajurit dan anggota milisi juga sudah membawa tiga penduduk desa lainnya ke tempat itu, dan mulai memukuli dan menginterogasi mereka tentang pembunuhan terhadap Manuel Gama.[†] Para prajurit dan milisi yang berada di tempat itu berada di bawah wewenang Letnan Sutrisno, Kepala Seksi Intelijen Kodim Bobonaro. Letnan Sutrisno hadir ketika para prajurit dan milisi memukuli para tahanan. Menurut beberapa saksi, ia juga menendang wajah dan badan salah satu tahanan ketika terbaring di tanah dengan tangan terikat.[‡]

Setelah menerima kabar tentang kematian Manuel Gama, tokoh-tokoh senior TNI dan sipil di Maliana berkumpul di kantor Bupati untuk merencanakan tanggapan mereka. Mereka yang hadir mencakup: Dandim, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; Bupati, Guilherme dos Santos; komandan milisi João Tavares; dan pimpinan FPKD kabupaten Bobonaro, Jorge Tavares. Menurut surat dakwaan, orang-orang tersebut membahas rencana untuk membunuh para anggota CNRT dan pegawai negeri sipil yang prokemerdekaan.[§]

Setelah rapat itu, kelompok tersebut bergerak dalam sebuah konvoi menuju ke dekat Desa Poegoa tempat Manuel Gama dibunuh, dan di mana setidaknya lima orang laki-laki ditahan oleh para prajurit TNI dan anggota milisi. Di sanalah, menurut para saksi, tiga orang laki-laki yang sebelumnya dipukuli, ditembak mati oleh prajurit-prajurit TNI. Keadaan di seputar pembunuhan ini tak meninggalkan keraguan bahwa ketiga orang itu dengan sengaja dieksekusi saat berada dalam tahanan, dan dengan kuat menunjukkan tanggung jawab langsung para perwira senior TNI dan komandan milisi, João Tavares.

Segera setelah mereka tiba di tempat pembunuhan, komandan milisi João Tavares dilaporkan berjalan ke arah salah satu tahanan dan berkata: “Orang-orang ini sudah menerima uang dari pemerintah, tetapi memberi makan Falintil. Kita harus bunuh orang-orang ini.”[¶] Mengikuti perintah ini, beberapa prajurit TNI menyeret ketiga tahanan—Carlito Mau Leto, Domingos Resi Mau, dan João Evangelista Lima Vidal—ke puncak sebuah bukit terdekat. Mereka diikuti Letnan Sutrisno, yang membawa senapan kaliber 5.56. Beberapa menit kemudian beberapa suara

.....
* Cailaco Indictment, paragraf 51.

† Cailaco Indictment, paragraf 57-59.

‡ Cailaco Indictment, paragraf 66.

§ Cailaco Indictment, paragraf 73.

¶ Cailaco Indictment, paragraf 78.

tembakan terdengar dari arah tempat para tahanan dibawa. Saksi-saksi mengatakan bahwa suara tembakan itu seperti suara dari senapan kaliber 5.56. Ketiga orang itu tidak pernah terlihat lagi.*

Dari tempat pembunuhan, konvoi para pejabat, prajurit, dan anggota milisi kembali ke Marco, di mana para penduduk dan pegawai negeri sipil sudah diperintahkan berkumpul di rumah Manuel Gama. Di sana, menurut saksi-saksi, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian secara langsung mengancam para pegawai negeri kabupaten, dengan menunjukkan bahwa kalau mereka mendukung kemerdekaan mereka akan menderita nasib yang sama seperti tiga orang yang baru dibunuh di Poegoa. Kemudian, Letnan Sutrisno memberikan perintah untuk menangkap empat orang, yang semuanya dikenal sebagai pendukung kemerdekaan: Paulino Soares, José Pau Lelo, António Soares, dan Manuel Maulelo Araújo.

Keempat orang itu dipisahkan dari kerumunan dan dibawa pergi ke kompleks SGI yang letaknya bersebelahan dengan Koramil. Pada sore harinya, tanggal 12 April, mereka ditembak mati oleh para prajurit TNI dan anggota milisi Halilintar. Seperti dalam kasus tiga orang yang dibunuh terlebih dahulu di Poegoa, sedikit keraguan bahwa keempatnya dibunuh ketika ditahan, dan bahwa pembunuhan terhadap mereka diperintahkan oleh para perwira senior TNI, termasuk Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian dan Letnan Sutrisno.

Beberapa saat setelah keempat orang itu dibawa ke Koramil, Letnan Kolonel Siagian, João Tavares, dan Jorge Tavares pergi ke Koramil dan berbicara dengan Letnan Sutrisno.† Setelah pembicaraan mereka, para prajurit TNI dan milisi Halilintar diinstruksikan untuk mengisolasi wilayah tersebut, dan Letnan Sutrisno memberi perintah agar empat tahanan tadi dibawa keluar. Begitu mereka berada di luar, para tahanan disuruh melarikan diri. Paulino Soares, yang termuda dari keempat orang itu, mulai berlari dan segera ditembak mati. Ketiga orang lainnya kemudian dibunuh dengan tembakan yang dilepaskan para prajurit TNI dan anggota milisi yang mengelilingi kompleks. Tubuh keempat orang tersebut dikumpulkan dalam satu tumpukan dan dijaga oleh beberapa prajurit TNI.‡

Letnan Sutrisno telah diidentifikasi sebagai salah satu dari pelaku langsung empat pembunuhan tersebut. Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, João Tavares, dan Jorge Tavares, hadir di lokasi dan tidak bertindak untuk menghentikan pembunuhan.§

Sampai dengan awal tahun 2003, mayat ketujuh korban pembunuhan Cailaco belum berhasil ditemukan. Para kerabat korban meyakini bahwa mayat-mayat itu dibawa oleh milisi dan prajurit TNI ke sebuah pantai dekat Atsabe, pada dini hari 13 April, dan dibuang ke laut. Tempat yang mungkin menjadi tempat pembuangan tubuh korban ditandai dengan sebuah monumen batu dan beberapa pakaian yang

* Cailaco Indictment, paragraf 79-81.

† Cailaco Indictment, paragraf 90.

‡ Cailaco Indictment, paragraf 97.

§ Cailaco Indictment, paragraf 92-96.

ditemukan di pantai pada pagi hari setelah pembunuhan, dan diyakini sebagai milik mereka yang meninggal. Di awal tahun 2000, sejumlah nelayan mengatakan kepada para penyelidik Polisi Sipil PBB bahwa pada pagi hari setelah pembunuhan mereka menemukan perahu-perahu mereka, yang semalam sebelumnya ditinggalkan di pantai, penuh dengan bercak darah dan dipindahkan dari tempat asalnya. Salah seorang nelayan mengatakan bahwa di pagi hari, ia melihat beberapa orang, yang digambarkannya sebagai milisi, mendorong satu truk sampah yang terperangkap di pasir.*

Tujuh pembunuhan yang terjadi pada 12 April 1999 menandai permulaan kampanye kekerasan sistematis yang secara resmi disetujui penguasa terhadap penduduk desa Kecamatan Cailaco yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan. (Lihat ringkasan kabupaten: Bobonaro.) Selama dua minggu berikutnya, para prajurit dan anggota milisi bersenjata melakukan patroli bersama, dan dalam patroli itu mereka membakar dan menjarah rumah-rumah, menahan dan memukuli ratusan penduduk desa, memerkosakan perempuan dewasa dan remaja dalam jumlah yang belum diketahui, dan membunuh sebanyak 20 orang. Tidak ada tindakan yang pernah diambil oleh pihak berwenang Indonesia terhadap orang-orang yang diduga atau diketahui melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Pembantaian di rumah Carrascalão (17 April 1999)

Setidaknya 12 orang dibunuh di Dili pada 17 April 1999, ketika milisi dan para prajurit TNI menyerang rumah seorang warga terpandang, Manuel Carrascalão.† Mereka yang meninggal adalah di antara sekitar 150 orang yang mencari perlindungan di rumah itu akibat meningkatnya kekerasan milisi di seluruh Timor-Leste. Serangan itu memperjelas kerjasama erat antara milisi dan pihak berwenang militer dan sipil dalam melakukan tindakan-tindakan kekerasan di tahun 1999. Serangan itu juga memberikan bukti keterlibatan langsung para prajurit TNI dalam pelanggaran hak asasi manusia, dan keterlibatan para perwira tinggi TNI dalam tindakan-tindakan tersebut.

Serangan itu terjadi menjelang sore hari, sesaat setelah rapat umum besar pro-otonomi di depan kantor gubernur. Dihadiri oleh sekitar 5.000 orang, termasuk para pejabat penting pemerintah, dan sebanyak 1.645 orang milisi,‡ rapat umum itu menandai peresmian kelompok milisi Aitarak, di bawah kepemimpinan Eurico Guterres. Dalam pidato utamanya, Guterres secara terbuka mengajak mereka yang hadir untuk “membersihkan” dan membunuh para pendukung kemerdekaan dan

* Lihat memorandum dari UNTAET DHRO-Bobonaro kepada SCU-Bobonaro, 16 Januari 2001 dan 27 April 2001.

† Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada UNTAET, DHRO-Dili, “Key Cases of HRVs/Abuses in Dili District,” September 2002, dan UNTAET, DHRO-Dili, “Dili Chronology,” Dili, 2002.

‡ Jumlah anggota milisi ini diambil dari laporan rahasia TNI tentang kejadian tanggal 17 April 1999. Lihat: Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/200/1999 tanggal 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

“para pengkhianat”, dan khususnya anggota keluarga Carrascalão. Menurut satu kesaksian tentang peristiwa tersebut, Guterres mendesak mereka untuk “melancarkan pembersihan terhadap semua orang yang telah mengkhianati integrasi. Tangkap dan bunuh mereka kalau perlu.”⁴

Satu laporan rahasia TNI tentang kejadian 17 April memberikan catatan yang lebih lengkap tentang pernyataan Guterres. Menurut dokumen tersebut, Guterres mengatakan:

“Pasukan Aitarak akan melaksanakan operasi sisir terhadap anggota pegawai negeri sipil yang sudah memakan dan menggunakan fasilitas dinas tetapi mengkhianati perjuangan integrasi. Pasukan Aitarak akan memberantas siapa saja baik pejabat, tokoh masyarakat, maupun pengusaha yang benar-benar sudah membantu perjuangan kelompok antiintegrasi. Pasukan Aitarak tidak segan-segan menghabisi Ir. Mário Viegas Carrascalão beserta kelompoknya yang telah berkhianat.”⁵

Rapat umum itu berakhir sekitar pukul 11.15 siang dengan rentetan tembakan senapan dari sekitar dua puluh anggota milisi. Segera sesudahnya, para milisi dan yang lainnya memulai pawai besar melalui jalan-jalan di kota Dili.⁶ Pawai itu dengan cepat berubah menjadi amuk kekerasan, dan dalam pawai itu rumah-rumah, kendaraan-kendaraan, dan kantor-kantor milik orang-orang yang dianggap sebagai pendukung kemerdekaan diserang dan dihancurkan. Salah satu sasaran kekerasan yang pertama adalah kantor satu-satunya surat kabar di Timor-Leste, *Suara Timor Timur*. Walaupun surat kabar itu milik seorang pendukung integrasi, para milisi rupanya marah dengan pemberitaannya tentang pembantaian di Gereja Liquiçá pada 6 April. Dengan alasan tersebut, sekelompok milisi yang berbasis di Liquiçá, BMP, menyerang kantor surat kabar itu, mengancam para staf lokal dan wartawan asing, dan menghancurkan sebagian besar peralatan kantor. Di bagian kota yang lain, para milisi membakar atau menghancurkan rumah-rumah, toko-toko, dan kendaraan-kendaraan.⁷

Amuk kekerasan di seluruh Dili berpuncak pada serangan terhadap rumah Manuel Carrascalão. Rumah Carrascalão dijadikan sasaran, sebagian karena kubu prointegrasi menganggapnya sebagai pengkhianat. Manuel yang di masa lalu adalah pendukung integrasi dengan Indonesia, dan saudara mantan Gubernur Timor

* Dikutip dalam Amnesty International, “East Timor: Seize the Moment,” ASA 21/49/99, 21 Juni 1999, halaman 20.

† Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain lain. Telegram rahasia No. STR/200/1999, 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16). Mário Viegas Carrascalão adalah saudara laki-laki Manuel Carrascalão, dan mantan Gubernur Timor Timur. Referensi di dalam dokumen ini lebih pada Mário daripada Manuel, yang bisa jadi sebuah kesalahan, atau mungkin merefleksikan pandangan Guterres bahwa Mário Viegas Carrascalão juga seorang pengkhianat.

‡ Rute tepat pawai tersebut diperinci dalam laporan rahasia TNI bertanggal 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

§ Laporan rahasia TNI tentang kejadian ini mencatat penghancuran terhadap tujuh rumah atau toko, empat mobil, dan sebuah sepeda motor. (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

Timur, dalam tahun-tahun belakangan menjadi lebih kritis terhadap pemerintah Indonesia dan telah membentuk satu organisasi prokemerdekaan yang moderat, bernama Gerakan Rekonsiliasi dan Persatuan Rakyat Timor Timur (GRPRTT).

Rumah Carrascalão juga dijadikan sasaran karena ia telah membukanya sebagai tempat pengungsian bagi orang-orang yang menyelamatkan diri dari kekerasan yang meningkat di Turiscaí, Maubara, Liquiçá, dan Alas. Dalam minggu-minggu sejak para pengungsi berlindung di sana, ia telah mendapatkan sejumlah ancaman. Carrascalão kemudian mengatakan kepada Amnesty International bahwa ia yakin ancaman-ancaman itu “disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak dari orang-orang yang diberinya tempat berlindung merupakan saksi dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia di seluruh Timor-Leste.”

Beberapa saat menjelang sore tanggal 17 April, sekelompok milisi Aitarak dan BMP mulai berkumpul di luar rumah Carrascalão. Beberapa berjalan kaki, sementara yang lain tiba dengan truk-truk besar. Salah satu truk dipergunakan untuk meruntuhkan pintu gerbang besi besar di depan rumah. Begitu gerbang terbuka, anggota milisi menyerbu masuk ke dalam halaman rumah dan, setelah memecahkan jendela-jendela, masuk ke dalam rumah itu sendiri. Para anggota milisi membawa berbagai macam senjata rakitan dan otomatis, dan dilaporkan berteriak-teriak mengancam, termasuk berseru “Bunuh Manuel Carrascalão!”[†]

Di dalam rumah, putra remaja Manuel Carrascalão, Manuelito, berusaha mencegah milisi menyerang para pengungsi. Segera sesudahnya, ia ditikam dan ditembak mati. Yang lainnya dibunuh atau dilukai parah oleh para milisi yang menggunakan parang dan pisau. Salah seorang milisi, Armando dos Santos, dituduh menikam seorang laki-laki bernama Antónino sampai mati dalam penyerangan ini. Pihak penuntut menuduh bahwa pisau dos Santos menjadi bengkok di tengah penikaman dan ia berhenti untuk meluruskan pisaunya sebelum menuntaskan pekerjaannya.[‡] Sejumlah pengungsi berusaha memanjat pagar untuk melarikan diri tetapi tidak berhasil karena rumah itu telah dikepung orang-orang bersenjata. Bersaksi di hadapan pengadilan di Jakarta terhadap Komandan Distrik Militer Dili, Letnan Kolonel Endar Priyanto di akhir 2002, seorang korban yang selamat berkata: “Saya berusaha melompati pagar dan lari tetapi beberapa orang mengejar saya dan saya dilukai dengan sebuah tebasan parang di punggung saya.”[§]

* Amnesty International, “East Timor: Seize the Moment,” ASA 21/49/99, 21 Juni 1999.

† Kesaksian Victor dos Santos, dikutip dalam “Saksi Kasus HAM TL Mengaku Lihat TNI Tembak Pengungsi,” *Suara Timor Lorosae*, 27 September 2002.

‡ Armando dos Santos dituntut oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat dengan dakwaan kejahatan terhadap umat manusia pada 5 Juni 2001. Ia dinyatakan bersalah karena pembunuhan terhadap seorang pengungsi dengan vonis pengadilan tanggal 9 September 2002. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara untuk pembunuhan ini dan dua pembunuhan lainnya.

§ Kesaksian Florindo de Jesus, dikutip dalam “Indonesian Soldiers Among Attackers...,” AFP, 8 Oktober 2002. Dokumen TNI tertanggal 17 (18?) April 1999 menyebutkan nama Florindo de Jesus sebagai salah satu dari lima orang yang “luka berat” akibat serangan (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

Serangan akhirnya berhenti dengan kedatangan satu kesatuan Brigade Mobil Polri. Sekitar 50 korban yang selamat dari pembantaian dibawa ke markas Kepolisian Resor (Polres) Dili, di mana mereka tetap dalam “perlindungan” untuk beberapa waktu. Di sana mereka bergabung dengan Manuel Carrascalão, anak perempuannya Christina, dan tokoh CNRT yang terkenal berani bicara Leandro Isaac.⁷ Sebagian yang terluka diangkut ke dalam ambulans, namun mereka ini pun dalam keadaan tidak aman. Salah seorang yang selamat bersaksi bahwa ambulans yang mengangkut dirinya berhenti di depan markas Aitarak, di mana para milisi mengguncang-guncangkan ambulans sambil berteriak “Bunuh mereka! Bunuh mereka!”[†]

Jumlah yang tepat orang-orang yang dibunuh dalam penyerangan tersebut tidak diketahui. Laporan rahasia militer yang dikutip di atas mengatakan bahwa lima orang luka parah dan 13 orang terbunuh—12 dari mereka dibunuh di rumah Carrascalão dan seorang lainnya dibunuh di tempat lain. Organisasi-organisasi hak asasi manusia menyebutkan jumlah korban yang sedikit lebih besar, sementara yang lain (termasuk Manuel Carrascalão sendiri) menyatakan bahwa jumlah korban bisa jadi mencapai 60 orang.[‡] Juga tidak diketahui di mana tubuh orang-orang yang meninggal dibuang. Seorang saksi dilaporkan melihat banyak mayat diangkut ke atas sebuah truk besar tak bertanda segera setelah serangan, dan dibawa pergi ke tujuan yang tak diketahui.[§] Di akhir 1999, seorang saksi lain menyatakan kepada Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor-Leste bahwa sebelas mayat dibawa dengan truk ke sebuah danau dekat Maubara, Kabupaten Liquiçá, tempat mayat-mayat itu dibuang.[¶]

Seperti dalam kasus-kasus kekerasan serius lain oleh milisi pada 1999, pihak berwenang militer dan kepolisian Indonesia berusaha menggambarkan serangan dan pembunuhan tersebut sebagai “bentrok” antara kelompok prointegrasi dan kelompok prokemerdekaan. Akan tetapi tidak terdapat bukti bahwa para pengungsi

* Polri mengatakan bahwa ada 96 orang yang berada dalam pengamanan polisi. Dari semuanya, 46 orang adalah mereka yang selamat dari pembantaian di rumah Carrascalão. Lihat Amnesty International, ASA 21/31/99.

† Kesaksian Victor dos Santos, dikutip dalam “Saksi Mengaku,” *Suara Timor Lorosae*, 27 September 2002.

‡ Mereka yang dilaporkan mati mencakup: Adelino dos Santos (18), Afonso Ribeiro (25), Alberto dos Santos (30), Eduardo dos Santos (25), Januario Pereira (40), João da Silva (25), Manuel Gama Intan Carrascalão (16 atau 18), Marlito Correia, Rafael dos Santos (25), dan Raul dos Santos (30). Seorang laki-laki lagi, Manuel Pinto (50 atau 67) dilaporkan dibunuh di terminal bus Becora (atau Terminal Cameia) pada hari yang sama. Dari UNTAET, DHRO-Dili, “Dili Chronology,” Dili, 2002, halaman 2. Pembunuhan terhadap Manuel Pinto dikonfirmasi dalam laporan TNI tanggal 17 (18?) April 1999, yang menyebutkan dirinya sebagai pensiunan pegawai negeri yang bertugas pada Kodim Baucau (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

§ Kesaksian Florindo dos Santos, dikutip dalam “Saksi Mengaku,” *Suara Timor Lorosae*, 27 September 2002.

¶ Menurut surat dakwaan untuk kasus ini yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat, mayat 11 korban dari Liquiçá dibawa dengan truk TNI ke Leboke, Liquiçá, pada 19 April untuk dikuburkan. Lihat Carrascalão Indictment (Dakwaan Carrascalão). Ada laporan yang tidak didukung bukti yang menyebutkan bahwa 30 mayat ditemukan dalam sebuah sumur dekat rumah Carrascalão di akhir September 1999. Lihat UNTAET, DHRO-Dili, “Key Cases of HRVs/Abuses in Dili District,” Dili, September 2002.

di dalam rumah Manuel Carrascalão terlibat dalam kekerasan apapun. Sebaliknya, ada bukti penting tentang keterlibatan langsung TNI di dalam serangan ini, dan juga persetujuan yang salah pada kekerasan tersebut dari para pejabat tinggi TNI dan Polri.

Sejumlah orang yang selamat dari serangan telah memberikan kesaksian bahwa para prajurit TNI yang berpakaian biasa berada di antara para penyerang. Seorang saksi, pelajar dari Maubara yang bernama Florindo de Jesus, bersaksi di pengadilan: “Saya yakin bahwa TNI yang melancarkan serangan, karena saya mengenali beberapa orang di antara para penyerang sebagai anggota TNI dari Maubara.” Ketika ditanya lebih terperinci, ia memberikan nama enam prajurit, semuanya bertugas di Kecamatan Maubara. Salah satu dari mereka, kata Florindo de Jesus, adalah pamannya sendiri. Saksi yang lain, Victor dos Santos mengatakan kepada para penyelidik pada Juli 2000 bahwa di belakang milisi yang berpakaian kaos hitam dan bandana merah-putih, ia melihat puluhan orang bertubuh tegap dengan potongan rambut pendek: “Saya mengenali mereka sebagai prajurit TNI dari Koramil di Maubara.”[†] Bersaksi di hadapan pengadilan di Jakarta terhadap Kepala Kepolisian Resor Dili, Letnan Kolonel Hulman Gultom, pada pertengahan 2002, Manuel Carrascalão mengatakan bahwa para prajurit TNI yang tidak berseragam bergabung dalam melakukan serangan.[‡]

Para perwira tinggi TNI dan Polri juga memfasilitasi pembunuhan melalui kegagalan mereka untuk bertindak saat kekerasan berlangsung sampai segalanya telah terjadi. Rapat umum sebelum pembantaian dihadiri sejumlah pejabat pemerintah yang paling senior di Timor-Leste termasuk Gubernur Timor Timur, Bupati Dili, dan Komandan Resor Militer Kolonel Tono Suratman. Rekaman video yang didapatkan para penyelidik PBB, lebih jauh lagi, menunjukkan Kolonel Tono Suratman berdiri di atas balkon lantai satu kantor gubernur, bersama dengan Mayor Jenderal Kiki Syahnakri (Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat), dan empat perwira senior militer lainnya.[§]

Tidak ada satupun dari para pejabat tersebut yang mengungkapkan di depan umum ketidaksetujuan atau kekhawatiran terhadap pernyataan Guterres atau keberadaan milisi bersenjata. Pihak berwenang militer atau kepolisian juga tidak satupun berusaha melucuti senjata sekian ratus milisi yang berpawai keliling kota Dili yang melanggar larangan hukum untuk membawa senjataapi. Laporan rahasia militer tentang kejadian tanggal 17 April, yang dikutip di atas, memberikan

* Kesaksian Florindo de Jesus dikutip dalam “Indonesian Soldiers Among Attackers in 1999 Dili Incident: Witness,” AFP, 8 Oktober 2002.

† Kesaksian Victor dos Santos dikutip dalam “Saksi Kasus HAM TL,” *Suara Timor Lorosae*, 27 September 2002. Dokumen TNI bertanggal 17 (18?) April 1999 menyebutkan nama Victor dos Santos sebagai salah satu dari lima orang yang “luka berat” akibat serangan tersebut (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

‡ Kesaksian Carrascalão dikutip dalam AFP, 7 Agustus 1999.

§ Rekaman video dimiliki oleh Unit Kejahatan Berat di Dili. Menurut beberapa keterangan yang belum dikukuhkan, para perwira lainnya itu mencakup: Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim dan Mayor Jenderal Adam Damiri.

uraian menyeluruh tentang pernyataan Guterres, dan tentang penghancuran serta pembunuhan yang menyusul kemudian, tetapi tidak menunjukkan adanya keprihatinan maupun niat untuk mengambil tindakan. Laporan tersebut hanya menyimpulkan bahwa persoalan ini akan ditangani Kepolisian Resor Dili.⁷

Bukti yang paling mencolok adalah kesengajaan di pihak perwira pimpinan TNI untuk Timor-Leste, Kolonel Tono Suratman untuk tidak mengambil tindakan apapun. Ketika Manuel Carrascalão pergi ke rumah Suratman menjelang sore hari 17 April untuk memita agar Suratman segera turun tangan menghentikan serangan yang akan terjadi terhadap para pengungsi, Suratman menolak memenuhi permintaan tersebut.[†] Penolakan Suratman telah dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Irlandia waktu itu, David Andrews, dan tokoh pro-otonomi, Basilio Araújo, keduanya pada saat itu sedang bersama dengan Suratman.[‡]

Mengingat pandangan politiknya, penjelasan Basilio Araújo mengungkapkan hal yang sangat penting. Bersaksi di hadapan pengadilan di Jakarta, Agustus 2002, ia mengatakan bahwa TNI tidak melakukan apapun untuk mencegah serangan ke rumah Carrascalão. Ketika diminta berkomentar terhadap pernyataan bahwa Tono Suratman sebenarnya bersikeras untuk membantu Carrascalão, Basilio menyampaikan kepada pengadilan: “Saya tidak melihat Pak Danrem [Suratman] berusaha untuk membantunya. Saya tidak melihatnya.”[§] Yang juga mengungkapkan keterangan penting adalah pernyataan dari hakim ketua Indonesia dalam pengadilan terhadap Eurico Guterres pada November 2002. Hakim ini mengatakan: “Tono [Suratman] mengabaikan laporan dari Manuel bahwa rumahnya akan diserang para anggota milisi pro-Jakarta. Dia tidak mengambil tindakan sampai insiden tersebut terjadi.”[¶]

Pihak Polri juga turut bertanggung jawab untuk pembunuhan di rumah Carrascalão, baik karena kegagalan mereka melakukan tindakan efektif untuk mencegah pembunuhan tersebut, maupun melalui kerja penyelidikan yang samasekali tidak memadai, dan mungkin dengan sengaja disalaharahkan. Para penyidik kepolisian disebutkan mendesak para saksi untuk mengatakan bahwa kekerasan dipancing oleh sebuah tembakan dari dalam rumah Carrascalão.^{**} Patut diperhatikan bahwa Polri pernah mengajukan skenario “provokasi” yang tepat sama dalam kasus pembantaian di Gereja Liquiçá dan mereka melakukannya lagi di awal Juli ketika para milisi menyerang satu rombongan bantuan kemanusiaan. (Lihat studi kasus: Penyerangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan.) Dalam ketiga kasus

* Dan Sat Gas Pam Dili kepada Dan Rem Up. Kasi Intel Rem 164/WD dan lain-lain. Telegram rahasia No. STR/200/1999, 17 (18?) April 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16).

† Menurut satu kesaksian tentang pertemuan tersebut, Suratman mengatakan kepada Carrascalão, “Kami tidak bisa berbuat apa-apa—kami netral. Anda yang tidak mau mengikuti permainan kami.” Dikutip dalam Dili DHRO 1999 report, 15 September 2002.

‡ Lihat Ian Martin, *Self Determination in East Timor*, halaman 27.

§ Dikutip dalam *Jakarta Post*, 9 Agustus 2002.

¶ Dikutip dalam *Sydney Morning Herald*, berita ditulis oleh Hamish McDonald, 30 November 2002.

** Kesaksian Florindo dos Santos, dikutip dalam “Saksi Mengaku,” *Suara Timor Lorosae*, 27 September 2002.

tersebut, klaim dari pihak Polri mengenai adanya provokasi sepenuhnya salah, dan tampak dirancang terutama untuk mengalihkan perhatian dari pelaku kejahatan yang sesungguhnya.

Pembunuhan dua mahasiswa di Hera (20 Mei 1999)

Pemuda dan mahasiswa termasuk yang dengan sengaja dijadikan sasaran oleh anggota milisi dan aparat keamanan Indonesia. Anggota-anggota organisasi prokemerdekaan, seperti Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur (DSMPTT), teramat rentan, dan banyak dari anggotanya yang diancam, dipukuli, dan dibunuh.

Dari semua kejadian yang sarasannya mahasiswa, yang paling terkenal adalah penahanan dan pembunuhan terhadap dua pemuda Augustino de Carvalho (24) dan Estevão Xavier Pereira (20) di Hera pada 20 Mei 1999.[†] Institut Politeknik Hera, tempat mereka belajar, sudah cukup lama menjadi fokus operasi bersama milisi dan TNI, sebagian karena banyak mahasiswa di sana menjadi anggota DSMPTT yang prokemerdekaan.

Pada 10 Mei, TNI dan milisi Aitarak menahan sekitar 100 orang mahasiswa dan penduduk Hera, yang berada di timur Dili, dan membawa mereka ke kantor Kepolisian Daerah (Polda) di Dili. Sebagian besar dari mereka kemudian dibebaskan, tetapi ini bukanlah akhir dari cerita. Setelah penangkapan, politeknik tersebut diduduki sekitar 50 prajurit pasukan paramiliter TNI di Timor-Leste yang dikenal sebagai pasukan Rajawali.[‡]

Pada 20 Mei, dua mahasiswa (yang kemudian dibunuh) kembali ke kampus di Hera, dengan tujuh orang lainnya untuk mengambil barang-barang mereka. Dalam perjalanan kembali ke kendaraan, mereka ditahan untuk diinterogasi oleh para prajurit TNI.[‡] Seorang perempuan yang tinggal dekat kampus dan menyaksikan proses interogasi itu memberi penjelasan berikut tentang pertemuan para mahasiswa dengan prajurit-prajurit TNI:

“Saya dapat melihat dari halaman saya bahwa para mahasiswa ada di seberang jalan dekat ruang keamanan bersama dengan aparat militer. Aparat militer mengosongkan tas para mahasiswa itu dengan membuang isinya ke tanah. [Dua mahasiswa] itu juga tergeletak di tanah dan para prajurit menendang dan memukuli mereka sampai parah. Saya melihat hal ini selama sepuluh menit. Saya kemudian pergi ke dalam dan membawa anak perempuan saya karena saya

.....
^{*} Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada laporan DHRO Dili, “Key Cases of HRVs/ Abuses in Dili District,” September 2002.

[†] Kesaksian dari seorang perempuan Timor Timur [nama dirahasiakan], direkam dan dikumpulkan di Australia oleh “East Timor Documentation Project,” 3 Desember 1999.

[‡] Menurut Amnesty Internasional, para prajurit itu adalah anggota pasukan Rajawali dan Batalion Infanteri 744. AI Doc. ASA 21/43/99.

tidak ingin diketahui melihat kejadian itu. Saya juga sangat ketakutan dan saya menangis ...”

Setelah ditanyai dan digeledah, kedua mahasiswa itu (Carvalho dan Pereira) dibawa pergi. Dalam menanggapi penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah organisasi hak asasi manusia, Yayasan HAK, pihak yang berwajib mengatakan bahwa kedua orang itu telah melarikan diri dari tahanan. Namun ada alasan untuk meyakini bahwa mereka sesungguhnya telah dipukuli dan dibunuh. Cerita saksi yang baru saja dikutip, berlanjut:

“Sekitar pukul 3 sore, saya tetap mengkhawatirkan [kedua mahasiswa itu] dan saya ingin mencari tahu apa yang terjadi pada mereka. Saya pergi menyeberang ke Politeknik berpura-pura perlu mencuci pakaian. Dari tempat ini biasanya kami mendapatkan air. Saya berhasil melihat ke dalam ruang keamanan. Ada sekitar 25 prajurit di dalam ruangan dan juga [kedua mahasiswa itu], kedua tangan mereka diikat di balik punggung di lantai sudut ruangan. Ada sesuatu di dalam mulut mereka yang menghalangi mereka untuk berteriak. Ada dua atau empat tentara yang bergiliran memukuli mereka berkali-kali dengan batang kayu panjang yang diambil dari pohon di halaman saya ... Sekitar pukul 9 malam, ketika lampu di rumah saya masih menyala, salah seorang tentara datang lagi ke rumah saya dan mengatakan bahwa saya seharusnya sudah tidur. Saya lalu mematikan lampu dan berpura-pura berangkat tidur. Segera sesudahnya saya mendengar dua suara tembakan berturut-turut yang datang dari seberang jalan dari arah ruang keamanan. Tembakan terdengar sangat dekat. Sekitar lima menit kemudian saya juga mendengar sebuah mobil dikendarai dengan sangat cepat keluar dari tempat yang sama. Dalam hati saya tahu bahwa suara tembakan itu berarti para mahasiswa itu sudah dibunuh.”

Dalam sebuah penggalian kuburan, yang dilaksanakan pada 30 Agustus 2000, para penyelidik menemukan apa yang diyakini sebagai tubuh dua orang laki-laki, yang dikubur bersama dengan kedua belah tangannya terikat.

Penahanan sewenang-wenang dan pemerkosaan di Lolotoe (Mei-Juni 1999)

Korban pelanggaran hak asasi manusia berat pada 1999 meliputi banyak penduduk desa biasa yang hidup di wilayah-wilayah yang dianggap basis kekuatan prokemerdekaan. Di wilayah-wilayah semacam itu, kesatuan-kesatuan TNI

* Kesaksian dari seorang perempuan Timor Timur [nama dirahasiakan], direkam dan dikumpulkan di Australia oleh “East Timor Documentation Project,” 3 Desember 1999.

† Kesaksian dari seorang perempuan Timor Timur [nama dirahasiakan], direkam dan dikumpulkan di Australia oleh “East Timor Documentation Project,” 3 Desember 1999.

dan milisi mengadakan operasi bersama untuk melakukan pembersihan, yang mengarah pada serangkaian pelanggaran termasuk penahanan sewenang-wenang, pembunuhan, dan pemerkosaan.

Satu operasi pembersihan semacam itu dilakukan di Kecamatan Lolotoe, Kabupaten Bobonaro di akhir Mei 1999. Selama beberapa hari, pasukan TNI bersama dengan para anggota milisi Kaer Metin Merah Putih (KMP) menangkap ratusan orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan dan pemimpin CNRT. Banyak dari mereka yang ditahan dipukuli dengan parah dan beberapa disiksa atau dipotong anggota tubuhnya oleh para penangkapnya dalam usaha untuk memeras pengakuan tentang hubungan mereka dengan Falintil. Beberapa kejadian pemerkosaan dan perbudakan seksual oleh TNI dan anggota milisi juga dilaporkan terjadi dalam konteks penyerangan ini.

Korban-korban dari operasi Lolotoe mencakup seorang pemimpin CNRT dari Desa Guda, Mário Gonçalves. Ia ditahan pada 24 Mei dan disiksa oleh satu kelompok besar milisi KMP, di hadapan kepala desa. Satu surat dakwaan kejahatan terhadap umat manusia yang diajukan oleh Penuntut Umum UNTAET pada Mei 2001, menggambarkan siksaan yang dialami Mário Gonçalves sebagai berikut:

“Ketika Mário Gonçalves keluar dari gereja ia dipukuli oleh para anggota milisi KMP sambil diseret ke lapangan di luar kantor CNRT. Di lapangan, Sabino Gouveia Leite [Kepala Desa], José Cardoso Fereira alias Mouzinho [wakil komandan KMP], dan João Franca da Silva alias Jhoni Franca [komandan KMP] memerintahkan para anggota milisi KMP untuk memukuli Mário Gonçalves secara bergantian. Sekitar 37 orang anggota milisi KMP memukuli Mário Gonçalves. João Franca da Silva alias Jhoni Franca juga menyerang Mário Gonçalves dengan sebilah parang, memotong lengan kanannya, dan menikamnya di pundak kiri.

“Sabino Gouveia Leite menyuruh José Cardoso Fereira alias Mouzinho dan João Franca da Silva alias Jhoni Franca untuk memotong telinga Mário Gonçalves... Telinga itu lalu dilempar ke tanah dan Sabino Gouveia Leite dan João Franca da Silva alias Jhoni Franca memaksa Mário Gonçalves untuk memakannya. Mário Gonçalves, yang ketakutan akan dibunuh, melakukan apa yang diperintahkan dengan memakan telinga kanannya.”

Banyak dari mereka yang ditahan dalam pembersihan juga ditahan tanpa dakwaan di Komando Rayon Militer (Koramil) Lolotoe sampai suatu saat pada Juli 1999. Kesaksian dan dokumentasi tentang penahanan sewenang-wenang terhadap mereka, dan akhirnya pembebasan mereka, menjelaskan kerjasama erat dan rutin antara milisi dengan pihak berwenang militer dan sipil dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia di Bobonaro.

.....
* UNTAET, General Prosecutor, Indictment of João Franca da Silva et al., (Case No: BO-06.1-99-SC), 25 Mei 2001.

Satu dokumen yang mengonfirmasi kembalinya enam orang ke Desa Guda pada 8 Juli mengungkapkan banyak hal. Dokumen ini menjelaskan bahwa keenam orang itu ditahan untuk “pembinaan” sejak 22 Mei, bahwa mereka sekarang sedang dikembalikan ke desa mereka “dalam keadaan aman dan sehat,” tetapi mereka bisa dipanggil untuk interogasi lebih lanjut di masa yang akan datang. Dokumen ini ditandatangani bersama oleh Komandan Rayon Militer Lolotoe Letnan Bambang Indra; Kepala Desa Guda, Sabino Gouveia Leite; dan Komandan KMP, José Cardoso Ferreira (alias Mouzinho).^{*} Ketiga orang ini dijadikan terdakwa pada 2001 untuk tindak kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada 1999.

Para perwira militer dan anggota milisi juga bekerjasama untuk menculik dan memerkosa perempuan dalam konteks operasi Lolotoe. Dalam satu kasus yang terkenal, tiga orang laki-laki menculik dan berulang-kali memerkosa tiga perempuan muda yang mereka curigai telah membantu Falintil. Dua dari pemerkosa yang disebut korban adalah tokoh-tokoh yang cukup dikenal, yaitu Komandan Rayon Militer, Letnan Bambang Indra, dan komandan milisi KMP, José Cardoso Ferreira (alias Mouzinho). Orang ketiga adalah petugas intelijen TNI, Francisco Noronha.

Pemerkosaan tersebut terjadi selama beberapa hari di akhir Juni 1999 di sebuah hotel di kota Atambua di Timor Barat. Menurut salah seorang korban, petugas intelijen TNI Noronha dan pemimpin milisi Ferreira mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka menolak untuk berhubungan seksual dengan ketiga orang itu, mereka akan dibunuh dan tubuh mereka akan dilempar ke laut. Dua dari laki-laki ini (Letnan Indra dan Ferreira) membawa senjata otomatis, dan paling tidak satu orang melengkapi diri dengan teknologi kontrasepsi.

Salah satu korban kemudian menceritakan siksaan yang dialaminya. Ia mengatakan bahwa Francisco Noronha masuk ke kamarnya dan memberikan injeksi di pantatnya, dengan mengatakan kepadanya bahwa injeksi itu untuk mencegahnya hamil. Menurut penuturannya, Noronha kemudian mengatakan kepada perempuan itu bahwa ia telah mendengar bahwa namanya tercantum dalam daftar orang-orang yang bekerja untuk Falintil, dan oleh karena itu ia harus melayani Noronha. Kemudian Noronha mendorong korban untuk rebah di tempat tidur dan memerkosanya.

Setelah dua malam mengalami pemerkosaan berulang kali, dan empat hari lagi dalam penahanan, para perempuan itu akhirnya dibawa ke Koramil Lolotoe. Di sana salah satu dari tiga pemerkosa, Letnan Bambang Indra, dalam kedudukannya sebagai Komandan Rayon Militer, membuat sepucuk surat yang memberi mereka izin untuk kembali ke rumahnya.

^{*} Lihat: “Surat Pengembalian,” 8 Juli 1999 (HRU Collection, Doc. BOB #9). Nama Ferreira muncul di dalam dokumen ini sebagai “José Mauzino Cardoso,” tetapi jelas bahwa ini adalah orang yang sama dengan José Cardoso Ferreira (alias Mouzhino) yang disebut dalam surat dakwaan.

Penyerangan terhadap UNAMET Maliana (29 Juni 1999)

Sekitar pukul 10 pagi tanggal 29 Juni 1999, sekitar 100 anggota kelompok milisi setempat, Dadurus Merah Putih (DMP), dari berbagai arah dengan cepat berdatangan ke kantor UNAMET di kota Maliana, Kabupaten Bobonaro, dan melempari kantor itu dengan batu. Bukti yang tersedia menunjukkan dengan jelas bahwa insiden itu direncanakan oleh para perwira Komando Distrik Militer, dan bahwa serangan itu diarahkan terhadap kompleks PBB dan orang-orang yang mengungsi di sana.⁷

Pada pagi hari 29 Juni, sekitar 30 orang pendukung kemerdekaan berkumpul di gerbang depan markas UNAMET untuk melaporkan serangan yang dilakukan para anggota milisi terhadap teman-teman dan sanak-saudara mereka pada malam sebelumnya. Pada pukul 10 pagi kerumunan di luar kompleks dan di lapangan besar seberang jalan diperkirakan mencapai 600 orang. Sementara sebagian besar kerumunan diyakini sebagai penonton biasa, sekelompok yang terdiri atas sekitar 100 orang yang mengenakan syal merah putih, sebagian dari mereka membawa parang, dikenali sebagai anggota milisi DMP. Identitas mereka kemudian dikonfirmasi oleh seorang pemimpin DMP, Paulus Fereira, dalam satu wawancara dengan seorang Pejabat Urusan Politik UNAMET.

Sesaat sebelum pukul 10.00, anggota-anggota kelompok milisi DMP terlihat berada di bawah pohon di ujung selatan lapangan, dekat pos Koramil. Dari sana, mereka bergerak cepat ke arah kompleks UNAMET, dengan batu-batuan di tangan. Rekaman film menunjukkan bahwa begitu mereka mencapai jalan, anggota-anggota milisi berlarian dan mulai melemparkan batu-batu ke arah gedung UNAMET. Rekaman itu juga memperlihatkan seorang laki-laki memakai jaket merah dan topi *baseball* di dekat tepi jalan, mengarahkan kelompok milisi dan menunjuk-nunjuk dengan tegas ke arah gedung UNAMET.

Batu-batu besar dilempar pertama kali menembus jendela-jendela yang menghadap ke jalan utama, dan kemudian melampaui tembok-tembok tinggi yang mengelilingi kompleks, menghancurkan jendela-jendela di sisi selatan dan timur bangunan. Hujan batu berlanjut masuk ke dalam kompleks selama 10 sampai 15 menit. Teriakan-teriakan para penyerang berlanjut untuk beberapa saat setelah lemparan batu mereda, dan para anggota milisi terlihat berada di lapangan besar yang berhadapan langsung dengan kompleks UNAMET selama beberapa jam sesudahnya.

Sebanyak 12 orang terluka dalam insiden tersebut, termasuk seorang Relawan PBB, dan beberapa dari sekitar 26 orang penduduk lokal yang melarikan diri masuk ke dalam kompleks UNAMET ketika serangan dimulai. Luka-luka yang diderita termasuk gegar otak, tulang remuk, luka koyak, dan memar yang parah; dan sedikitnya dua orang penduduk setempat jatuh pingsan akibat lemparan keras ke

.....
⁷ Kecuali jika disebutkan lain, uraian ini didasarkan pada laporan yang dibuat UNAMET tidak lama setelah kejadian dan diserahkan kepada para pejabat Pemerintah Indonesia. UNAMET, Political Affairs Office, "Report on 29 June Incident in Maliana," 5 Juli 1999. Dicitak ulang di dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book on Political and Human Rights in East Timor*, Dili, November 1999.

kepala mereka. Hujan batu juga berakibat kerusakan barang, baik bangunan PBB itu sendiri maupun kendaraan-kendaraan PBB.

Tindakan polisi terhadap kejadian ini sangatlah tidak memadai dan menunjukkan ketidakmauan, atau ketidakmampuan, untuk melakukan tindakan efektif terhadap milisi walaupun mereka jelas-jelas melakukan suatu tindak pidana. Karena tekanan internasional yang kuat, Polri menahan dan menyidik lima orang milisi karena peran mereka di dalam serangan tersebut. Namun, kasus ini tidak sungguh-sungguh diselidiki, dan setelah menerima hukuman percobaan, semua tersangka dibebaskan.

Kelemahan tindakan Polri tidak mungkin dikaitkan dengan kurangnya informasi sebelumnya mengenai kemungkinan adanya serangan. Dalam beberapa hari sebelum kejadian, petugas-petugas UNAMET dan pihak lain telah melaporkan kepada Polri tentang adanya sejumlah ancaman terhadap fasilitas dan personel PBB. Pada 28 Juni, para perwira Polisi Sipil PBB menyampaikan sebuah laporan yang bisa dipercaya bahwa serangan milisi terhadap UNAMET direncanakan untuk dilancarkan pada pagi hari tanggal 29 Juni.

Walaupun telah ada laporan-laporan sebelumnya seperti itu, tidak lebih daripada enam polisi biasa yang bertugas di depan markas UNAMET ketika serangan terjadi. Dua dari enam orang tersebut bisa jadi anggota unit bantuan Polri, yang dikenal sebagai Kamra. Ketika serangan ke kompleks PBB dimulai, seorang petugas Polri melakukan usaha sebentar tetapi tidak efektif untuk menghentikan, dan ia bersama rekan-rekannya segera berbalik dan lari mencari perlindungan. Rekaman film dari dalam kompleks menunjukkan bahwa sejumlah petugas kepolisian Indonesia berada di sana selama dan segera setelah serangan selesai. Setidaknya salah satu dari mereka dilaporkan sempat memberikan bantuan kepada staf PBB dan orang-orang yang berlindung di kompleks PBB.

Selain enam polisi yang berjaga di depan kantor UNAMET, sekitar 24 orang polisi disebutkan ditempatkan untuk membantu mengendalikan kerumunan orang di lapangan seberang jalan, sementara satu kontingen Brigade Mobil (Brimob) yang terdiri atas 20 orang dilaporkan ditempatkan untuk menjaga helikopter PBB yang telah mendarat di sana sekitar pukul 09.30. Namun tidak satupun dari pasukan ini yang bertindak mencegah kekerasan dan intimidasi, yang dibiarkan tanpa henti selama sekitar 15 sampai 20 menit. Sekitar 20 orang polisi Brigade Mobil (Brimob) akhirnya datang di tempat kejadian setelah kekerasan mereda.

Tindakan Polri yang tidak memadai tersebut sangat bermasalah mengingat dekatnya jarak antara kantor UNAMET dengan berbagai kantor Polri di Maliana dan cukup cepatnya insiden dilaporkan kepada mereka. Kantor Kepolisian Resor hanya berjarak sekitar 500 meter dari kantor UNAMET, dan ada sebuah kantor polisi (Kepolisian Sektor) sekitar 150 meter dari sana. Selain itu ada markas Komando Rayon Militer yang berjarak 100 meter dari kantor UNAMET. Sebuah panggilan darurat dikirimkan dari UNAMET ke alat operator kepolisian dalam menit pertama serangan dimulai, dan seorang wartawan secara langsung mengingatkan petugas-petugas Polres beberapa menit kemudian.

Yang sama bermasalahnya dengan tanggapan Polri yang lamban adalah tindakan Polri ketika pada akhirnya mereka tiba di tempat kejadian. Walaupun ada bukti yang jelas bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, baik polisi biasa maupun Brimob tidak melakukan satupun penahanan. Seperti yang sudah dikemukakan di atas, anggota-anggota milisi masih terlihat dan terdengar di wilayah sekitar kompleks UNAMET selama beberapa jam setelah serangan. Beberapa hari sesudahnya, milisi DMP tampak bebas beroperasi dan melakukan tindak intimidasi dan kekerasan, tanpa ada tindakan hukum.

Serangkaian perkembangan pada siang dan malam sebelum kejadian, dan unsur-unsur serangan itu sendiri, mengukuhkan dugaan mengenai hubungan antara kelompok milisi, Dadurus Merah Putih, dengan para perwira TNI di Maliana. Hubungan itu, seperti yang digambarkan secara terperinci di bawah, membantu menjelaskan mengapa Polri tidak mau atau tidak mampu mengendalikan kelompok milisi tersebut.

Pada 28 Juni, sehari sebelum kejadian, satu pertemuan lengkap milisi DMP diadakan pada pukul 07.30 di gedung olah raga di seberang lapangan kantor UNAMET. Yang hadir dalam pertemuan tersebut, menurut sejumlah laporan, adalah Komandan Distrik Militer (Dandim) Maliana, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; Perwira Seksi Intelijen Kodim, Letnan Satu Sutrisno; Komandan DMP, Domingos dos Santos; dan dua pemimpin lain DMP, Mau Buti dan Julião Gomes. Tiga orang yang disebut terakhir adalah anggota TNI yang masih aktif atau sudah pensiun.

Dilaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Dandim Letnan Kolonel Siagian memberikan pengarahan kepada DMP tentang tugas-tugas mereka yang berkaitan dengan Konsultasi Rakyat dan kedatangan UNAMET. Para saksi melaporkan bahwa Siagian menekankan beberapa hal berikut: bahwa Konsultasi Rakyat tidak diperlukan di Kabupaten Bobonaro; bahwa tak seorangpun diperbolehkan mendekati kantor UNAMET; bahwa staf lokal UNAMET harus ditakut-takuti dan digantikan oleh anggota DMP; dan bahwa bendera UNAMET harus diturunkan. Seorang anggota DMP yang hadir pada saat itu bersaksi bahwa Letnan Kolonel Siagian juga mengatakan kepada para milisi agar tidak mengkhawatirkan tindakan atau reaksi dari Polri atau Brigade Mobil yang ditugaskan untuk menjaga kompleks PBB karena, menurut kata-katanya, “mereka adalah bagian dari kita.”

Pengamatan yang dilakukan pada pagi hari 29 Juni, dan kesaksian dari orang-orang yang ada di tempat kejadian, memperkuat tanpa sedikitpun keraguan akan kemungkinan hubungan antara para pejabat militer setempat dan milisi, dan tanggung jawab bersama mereka atas serangan yang terjadi.

Setidaknya dua saksimata setempat melaporkan melihat Perwira Seksi Intelijen Kodim Letnan Satu Sutrisno dan Komandan Distrik Militer Letnan Kolonel Siagian di tempat kejadian mengenakan pakaian sipil, dan kedua saksi itu sama mengatakan bahwa kedua perwira itu tidak melakukan apapun untuk mencegah serangan atau menghentikannya ketika serangan itu berlangsung. Ketika Pejabat Urusan Politik UNAMET tiba di tempat kejadian sekitar 15 menit setelah insiden dimulai, ia menemui Letnan Kolonel Siagian, yang kemudian memperkenalkannya kepada

tiga komandan milisi DMP, dengan mengatakan bahwa mereka ingin menjelaskan tindakan mereka kepada UNAMET. Para saksi setempat juga melaporkan nama-nama sejumlah anggota TNI aktif maupun yang sudah pensiun yang berada di antara kelompok milisi itu pada saat kejadian, semuanya memakai pakaian sipil. Akhirnya, penting diperhatikan bahwa, di akhir serangan, para anggota milisi membentuk formasi militer dan berbaris menuju pos militer setempat, yang berada sekitar 100 meter dari kompleks UNAMET.

Secara bersama, bukti-bukti ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kelompok milisi yang bertanggung jawab atas serangan tanggal 29 Juni, DMP, dikendalikan oleh perwira-perwira TNI di Maliana, dan lebih khusus lagi oleh Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, dan Perwira Seksi Intelijen Kodim, Letnan Satu Sutrisno. Berdasarkan penemuan ini, sangatlah sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa serangan tersebut, dan terbatasnya usaha resmi untuk mencegah dan menghentikan serangan itu, merupakan bagian dari usaha para pejabat yang berwenang ini untuk menghambat atau merongrong kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penyerangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan (4 Juli 1999).

Pada 4 Juli sekitar pukul 4 sore hari Minggu, satu rombongan kendaraan yang baru kembali dari satu misi bantuan kemanusiaan membantu para pengungsi dalam negeri, diserang oleh sekitar 20 orang anggota milisi bersenjata Besi Merah Putih (BMP) ketika rombongan itu melewati kota Liquiçá. Seorang anggota staf UNAMET dijadikan sasaran langsung, banyak personel organisasi nonpemerintah yang diserang, dan salah satunya dibawa ke rumah sakit karena menderita luka serius di kepala. Kendaraan-kendaraan UNAMET dan organisasi nonpemerintah mengalami kerusakan berat.^{*}

Sebagai tanggapan terhadap keadaan yang semakin tidak aman, diputuskan untuk mengungsikan semua personel UNAMET dari wilayah Liquiçá pada hari yang sama, dan sebuah helikopter dikirimkan dari Dili untuk evakuasi ini. Namun, rencana evakuasi harus dihentikan ketika satu kelompok lain milisi bersenjata, mungkin BMP, menyerang helikopter dengan batu-batu dan senapan rakitan. Usaha evakuasi kedua juga dihalangi ketika milisi mengepung personel UNAMET dan berusaha menyerang anggota staf lokal UNAMET.

Dua serangan itu terjadi di tengah serangkaian ancaman terhadap personel PBB di kota Liquiçá—dan hanya beberapa hari setelah serangan terhadap kantor UNAMET di Maliana serta intimidasi milisi terhadap personel PBB di Viqueque. Sejumlah insiden ini dilaporkan kepada pihak berwenang Kepolisian

^{*} Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini berdasarkan pada laporan yang disusun UNAMET segera setelah kejadian, dan diserahkan kepada para pejabat pemerintah Indonesia. UNAMET, Political Affairs Office, "Report on the Liquiçá Incidents of 4 July," Dili, 12 Juli 1999. Dicitak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book on Political and Human Rights in East Timor*, Dili, November 1999.

Resor (Polres) di Liquiçá, sehingga kemudian ditempatkan sejumlah personel tambahan dari Brigade Mobil untuk melindungi staf UNAMET. Tetapi, berbagai peringatan dan penjagaan ini tidak menghasilkan pengaruh penting pada kebebasan milisi yang bergerak ke seluruh bagian kota dan melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan.

Rombongan bantuan kemanusiaan itu meliputi sekitar 50 orang wakil organisasi-organisasi nonpemerintah setempat, dan sekitar 20 pengungsi dalam negeri yang telah dievakuasi dari beberapa desa di sepanjang perbatasan antara Ermera dan Liquiçá untuk mendapatkan perawatan medis. Kelompok itu disertai oleh Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET dan seorang wakil dari UNHCR. Sekitar satu jam sebelum mencapai Liquiçá, dua orang Perwira Penghubung Militer UNAMET, yang berada di wilayah tersebut untuk penugasan lain, bergabung dengan rombongan ini.

Pada saat serangan terjadi, rombongan sedang berhenti dan banyak dari penumpangnya sedang memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat dengan meluruskan kaki-kaki mereka atau membeli minuman dan makanan ringan di toko-toko sekitarnya. Pejabat Urusan Kemanusiaan meminta berhenti sejenak untuk berbicara dengan para Perwira Penghubung Militer UNAMET, yang berencana meninggalkan rombongan di tempat itu. Karena khawatir akan keamanan para pengungsi dalam negeri, Pejabat Urusan Kemanusiaan meminta para Perwira Penghubung Militer kembali ke wilayah distribusi bantuan kemanusiaan untuk memastikan agar penduduk tidak diganggu oleh milisi. Setelah menyelesaikan pembicaraannya, pejabat UNAMET itu mulai berjalan dari mobil Perwira Penghubung Militer, menyusuri jalan kembali, dan berbelok di sebuah sudut menuju ke bagian depan rombongan. Ketika ia berbelok itulah, ia menyaksikan saat-saat awal terjadinya serangan milisi.

Cuplikan gambar televisi dan kesaksian dari lebih daripada selusin orang, termasuk beberapa anggota BMP dan orang-orang yang menyaksikan, memungkinkan dibuatnya rekonstruksi insiden ini. Sekitar lima menit setelah rombongan berhenti di Liquiçá, sebuah mobil van mini berwarna hijau-biru dengan tulisan "Miramar" di sisinya melaju menuruni bukit dari selatan dan berhenti mendadak di dekat pertengahan deretan kendaraan yang sedang berhenti. Ketika mobil itu berhenti, sekitar 20 orang muda berlompatan dan mulai mendekati para staf organisasi nonpemerintah dan UNAMET, beberapa dari mereka berteriak "bunuh mereka!" Sebagian besar membawa parang, pisau, atau senapan rakitan. Setidaknya seorang anggota milisi membawa sepucuk senjata otomatis. Tanpa peringatan atau provokasi para anggota milisi mulai menyerang, mengayun-ayunkan parang dan pisaunya dengan cara mengancam, mengarahkan senapan-senapan mereka kepada para anggota rombongan, dan menghancurkan kaca jendela-jendela sebagian besar mobil. Serangan berlanjut ketika orang-orang berusaha menyelamatkan diri dengan berlari dan mengendarai mobil. Setidaknya dua orang saksimata mengatakan bahwa anggota-anggota milisi bersenjata mendekati dan menghunjamkan senjata-senjata ke dalam salah satu kendaraan UNAMET ketika mobil itu bergerak ke timur menuju jalan utama ke arah Dili.

Yang paling parah terkena serangan adalah staf organisasi nonpemerintah, tetapi personel UNAMET juga dijadikan sasaran. Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET diancam oleh tiga orang milisi yang menodongkan senjatanya langsung ke dirinya dalam jarak dekat. Cuplikan gambar televisi juga menunjukkan si pejabat ini berusaha melindungi beberapa anggota rombongan, sebelum ia dan yang lainnya berbalik arah dan pergi menyelamatkan diri dengan sebuah mobil. Sebagian besar rombongan akhirnya berhasil bergerak ke kantor Polres Liquiçá yang berdekatan dengan tempat kejadian, sementara sekitar sepuluh orang pergi ke kantor Polsek. Akhirnya, semua anggota rombongan termasuk personel UNAMET dibawa ke Polres. Di sana Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET secara sukarela menyerahkan kepada polisi sepucuk senapan rakitan yang ditemukan di dalam kendaraannya.

Beberapa orang mengalami luka-luka dalam serangan dan sebagian besar terguncang berat. Rekaman gambar film memperlihatkan bahwa satu orang ditendang secara brutal di kepala oleh seorang anggota BMP. Korban tersebut adalah Laurentino Soares, pengemudi salah satu mobil organisasi nonpemerintah, yang dibawa ke rumah sakit dengan luka parah di kepalanya. Seorang anggota BMP bersaksi bahwa Soares juga dihantam kepalanya dengan sepucuk senapan sebelum ditendangi. Dua anggota BMP juga mengalami luka tembak selama insiden. Mereka diidentifikasi sebagai Romaldo Coreia Martins, komandan pos BMP setempat dan anggota unit bantuan Polres Liquiçá (Kamra), dan Fernando Ramos, seorang anggota BMP dan petani. Ketiga korban dibawa ke rumah sakit militer Wirahusada di Dili, di mana mereka diwawancarai personel UNAMET pada 4 Juli dan kemudian pada 6 Juli. Laurentino Soares kemudian dipindahkan ke fasilitas medis yang lain. Enam orang yang dilaporkan hilang setelah serangan kemudian ditemukan.

Segera setelah serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan ini, satu kelompok milisi bersenjata melancarkan serangan terpisah terhadap personel UNAMET yang bersiap mengungsi dari Liquiçá. Tidak ada yang terluka dalam kejadian ini dan semua personel akhirnya dibawa kembali ke Dili dengan selamat, tetapi serangan itu kembali menjelaskan ketidakmauan atau ketidakmampuan Polri untuk mencegahnya.

Keputusan untuk evakuasi sudah diambil sebagai tanggapan terhadap laporan-laporan awal tentang serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan tersebut, dan rangkaian serangan dan ancaman terhadap PBB selama dua hari sebelumnya. Sebuah helikopter dikirim dari Dili ke tempat yang ditentukan di pantai dekat Liquiçá, dan semua staf PBB berkumpul di sebuah rumah bersiap untuk pindah ke tempat tersebut dalam satu rombongan. Ketika staf PBB menunggu, mereka dikawal oleh satu kontingen Brigade Mobil (Brimob).

Namun rencana evakuasi harus ditunda ketika dua anggota staf PBB, seorang Polisi Sipil dan Perwira Keamanan Lapangan, disergap oleh anggota-anggota milisi ketika mereka berkendara ke arah pantai menuju ke helikopter. Para anggota milisi membawa parang dan senjata rakitan dan mengacungkan senjata itu ke personel PBB. Walaupun ada ancaman seperti ini, kedua orang staf PBB itu

berhasil memacu kendaraannya ke pantai untuk memperingatkan penerbang dan para penumpang tentang kehadiran milisi, dan tentang kemungkinan serangan. Keputusan diambil untuk menerbangkan helikopter ke tempat lain untuk mengalihkan perhatian milisi keluar dari wilayah tersebut. Ketika helikopter bersiap lepas landas, milisi tiba dan mulai melempari helikopter dengan batu. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian juga melaporkan bahwa tembakan juga dilepaskan ke arah helikopter.

Setelah helikopter itu lepas landas, rombongan PBB yang terdiri atas delapan buah mobil yang bersiap untuk evakuasi bergerak ke tempat evakuasi alternatif. Namun segera setelah tiba di tempat, mereka dikepung oleh para anggota milisi yang tiba dengan sebuah truk. Milisi memukul-mukul jendela mobil, mengacungkan senjata-senjata mereka kepada para penumpang dengan sikap mengancam, dan berusaha menarik sedikitnya satu orang staf lokal UNAMET dari dalam mobil. Polisi Indonesia yang ada di tempat kejadian tidak berbuat apapun untuk menghentikan serangan. Mereka tidak mencegah tindakan para anggota milisi, yang tetap berada di tempat dengan sikap mengancam.

Akhirnya, personel UNAMET berhasil keluar dari tempat kejadian. Tetapi ketika mereka bergerak ke arah Dili, mereka menghadapi penghalang jalan di dekat kantor Polres Liquiçá yang dijaga oleh dua orang milisi, salah satunya terlihat membawa sepucuk senapan otomatis. Karena tidak bisa melanjutkan perjalanan, rombongan itu berbelok memasuki kantor Polres Liquiçá, dan mereka bergabung dengan para anggota rombongan bantuan kemanusiaan yang sudah berada di sana. Kemudian pada malam yang sama, kedua rombongan kembali dalam satu konvoi ke Dili, dan sampai dengan selamat di kota itu sekitar pukul 10 malam.

Dalam satu kejadian yang berhubungan, dua mobil UNAMET yang telah dikirim dari Dili menghadapi satu penghalang jalan milisi beberapa kilometer di timur Liquiçá. Beberapa anggota milisi mengarahkan senjata rakitannya ke mobil PBB pertama yang membawa Polisi Indonesia, Kolonel Sitompul, dan Polisi Sipil PBB Superintendent Polden. Ketika mobil pertama sudah lewat, para milisi lalu mengarahkan senjatanya ke mobil kedua, yang mengangkut seorang perwira Polisi Sipil PBB lain. Setidaknya satu senjata rakitan ditembakkan ke arah mobil-mobil UNAMET, tetapi tidak timbul kerusakan atau luka-luka.

Bukti yang ada secara kuat menunjukkan bahwa Polri turut serta dalam serangan 4 Juli, atau paling sedikit tidak mau atau tidak mampu menghentikan serangan tersebut. Kesimpulan ini diperkuat oleh penolakan Polri memberikan pengawalan yang diminta untuk rombongan bantuan kemanusiaan, tindakan Polri yang tidak memadai ketika serangan sedang berlangsung, perilaku Polri segera setelah kejadian, dan sifat penyelidikan mereka selanjutnya. Satu segi yang sangat bermasalah dari tindakan Polri adalah energi yang mereka keluarkan untuk membangun tuduhan-tuduhan palsu tentang provokasi dari organisasi nonpemerintah dan UNAMET, sementara tidak mengambil tindakan apapun terhadap kelompok-kelompok milisi yang diketahui telah melakukan tindak pidana. Seperti dalam kasus penyerangan terhadap markas UNAMET di Maliana,

tekanan internasional membuat dilakukannya penahanan terhadap beberapa orang milisi. Tetapi, para tersangka segera dilepaskan setelah dijatuhi hukuman percobaan yang singkat.

Keprihatinan akan sikap pihak Polri terhadap rombongan bantuan kemanusiaan mulai muncul beberapa hari sebelum serangan milisi tanggal 4 Juli. Sebelum berangkat, organisasi-organisasi nonpemerintah—melalui UNAMET—telah meminta pengawalan dari Polri untuk menyertai rombongan, dan permintaan ini tampaknya disetujui. Namun, sesaat sebelum rombongan siap berangkat, pejabat Polri yang berwenang memberitahu UNAMET bahwa Polri tidak akan memberikan pengawalan. Alasan yang diberikan adalah bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan bukan mandat UNAMET, walaupun UNAMET menjelaskan bahwa UNAMET meminta pengawalan untuk organisasi nonpemerintah yang mengorganisasikan rombongan. Di pagi hari Minggu tanggal 4 Juli, UNAMET mengemukakan kepada Polri satu permintaan lagi agar, karena adanya ancaman serangan milisi, rombongan dikawal oleh Polri ketika dalam perjalanan pulang ke Dili. Ini disetujui, tetapi tidak terjadi. Tak bisa disangkal lagi, penolakan untuk memberikan satu pengawalan Polri menciptakan keadaan dalam mana suatu serangan dapat dengan mudah terjadi.

Polri juga gagal bertindak dengan efektif ketika serangan terhadap rombongan bantuan kemanusiaan sedang berlangsung, membiarkan insiden berlanjut tanpa halangan, dan tidak mengambil tindakan apapun untuk menahan orang-orang yang bertanggung jawab. Mengingat kenyataan bahwa insiden tersebut terjadi begitu dekat dengan kantor Polsek dan berjarak hanya beberapa menit, kalau mengendarai mobil, dari kantor Polres, kegagalan Polri untuk menghentikan serangan atau untuk menahan para pelaku patut dipermasalahkan.

Akhirnya, penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan pihak Polri dengan jelas ditandai sikap memihak. Dari semula, usaha Polri diarahkan untuk membuktikan tuduhan bahwa serangan “diprovokasi” oleh orang-orang yang berada di dalam rombongan bantuan kemanusiaan. Sementara itu, tidak ada usaha yang dilakukan untuk menahan atau menginvestigasi para anggota milisi yang terlihat menyerang rombongan dengan senjata. Kebanyakan bukti mengarah pada kesimpulan bahwa penyelidikan Polri dipengaruhi oleh pemimpin TNI, tidak memperhatikan prosedur kepolisian yang sesungguhnya.

Ringkasnya, sikap pasif dari pihak Polri terhadap para pelaku serangan, dan tidak memadainya penyelidikan mereka, dengan jelas menunjukkan bahwa milisi berada di bawah kendali dan dilindungi oleh pihak berwenang TNI, yang terhadapnya Polri tidak memiliki kekuasaan efektif.

Pembunuhan Staf UNAMET di Boboe Leten (30 Agustus 1999)

Yang termasuk menjadi sasaran pelanggaran berat hak asasi manusia baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara adalah staf lokal UNAMET. Setidaknya 14 orang staf lokal UNAMET dibunuh dalam tahun 1999, dan banyak lainnya yang menderita luka-luka, mendapat ancaman pembunuhan, dan dipindahkan secara paksa.*

Para staf lokal dijadikan sasaran karena diduga atau memang bersimpati prokemerdekaan, dan karena sikap umum antipati terhadap UNAMET. Antipati ini dipancing oleh tuduhan-tuduhan yang dibuat pejabat-pejabat Indonesia tentang pemihakan dan ketidakadilan UNAMET. Dengan kata lain, pembunuhan yang terjadi bukanlah tindak kekerasan yang acak tetapi pembunuhan bermotivasi politik. Lebih jauh lagi, dalam hampir setiap kasus, tindakan itu dilaksanakan dengan sepengetahuan atau keterlibatan langsung pasukan militer dan kepolisian Indonesia.

Pembunuhan terhadap dua anggota staf UNAMET, João Lopes dan Orlando Gomes, dan usaha pembunuhan terhadap staf ketiga, Alvaro Lopes, di Ermera adalah contoh-contoh paling jelas dari pola umum ini. Ketiga orang tersebut adalah staf UNAMET yang bekerja di tempat pemungutan suara di Desa Boboe Leten, di Kecamatan Atsabe. Mereka diserang oleh milisi bersenjata ketika sedang mengangkut kotak-kotak suara ke mobil UNAMET di akhir pemungutan suara pada 30 Agustus.†

Kesulitan dimulai di sore hari, ketika sekelompok milisi yang bersenjatakan parang, pisau, dan senapan tiba di tempat pemungutan suara, dan mulai mengeluarkan ancaman-ancaman terhadap staf lokal UNAMET. Para saksimata mengatakan bahwa milisi tiba dengan menggunakan sebuah mobil mirip jip berwarna biru gelap (sebuah Kijang), dan bahwa mereka disertai oleh beberapa anggota TNI yang membawa senjata otomatis.

Staf UNAMET melaporkan kehadiran milisi itu melalui radio dan mengungkapkan kecemasan akan keamanan kotak suara dan keselamatan mereka sendiri. Pesan itu disampaikan ke pusat pemungutan suara yang terdekat, di Lauana. Setelah menetapkan bahwa pemungutan suara sudah selesai di Lauana, regu Lauana diarahkan untuk segera membawa kendaraan mereka dan pergi berombongan dengan kawalan Polri ke Boboe Leten. Rombongan tiba di Boboe Leten sekitar pukul 5 sore. Dua atau tiga menit kemudian, pemimpin rombongan melaporkan

.....
* Staf UNAMET yang diketahui telah dibunuh pada 1999 adalah: João Lopes, Ruben Barros Soares, Domingos Pereira, José Ernesto Jesus Maia, Orlando Gomes, Leonel Silva de Oliveira, Manuel de Oliveira, Mariano da Costa, Ana Lemos, Carlos Maia, Abru da Costa, Hilario Boavida da Silva, Francisco Taek, dan Paulos Kelo. Tidak jelas apakah semua yang dibunuh ini dijadikan sasaran karena mereka pegawai UNAMET, tetapi sebagian besar dibunuh karena alasan ini.

† Satu laporan internal TNI secara salah menyebutkan bahwa ketiga orang itu meninggal. Lihat: Telegram rahasia dari Dandim Ermera (Letnan Kolonel Muhammad Nur) kepada Danrem 164/WD (Kolonel Noer Muis), No. TR/148/1999, 31 Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #42).

melalui radio bahwa milisi sedang menembakkan senjata otomatis di sekitar tempat pemungutan suara. Serangan sedang berlangsung.^{*}

Saat milisi dan prajurit TNI menembak-nembakkan senjata otomatis mereka, seseorang yang kemudian diidentifikasi sebagai prajurit TNI, João da Costa, memasuki pusat pemungutan suara. Di sana ia menikam João Lopes yang sedang membawa sebuah kotak suara ke kendaraan UNAMET yang sedang menunggu. Milisi lalu menyeret Lopes keluar, di mana dua orang milisi lainnya menikamnya di punggung. Staf UNAMET berhasil mengambil Lopes dan menempatkannya di bagian belakang mobil UNAMET. Ia kemudian dibawa ke gedung Polisi Sipil PBB di kota Atsabe. Para perwira Polisi Sipil PBB mengupayakan perawatan medis darurat untuk mengatasi lubang di paru-paru korban dan banyaknya kehilangan darah. Walaupun upaya sudah dilakukan, João Lopes meninggal tidak lama setelah pukul 18.00.

Sementara itu di Boboe Leten, para milisi menyerang lagi dua petugas tempat pemungutan suara. Menurut satu laporan internal PBB, satu dari dua korban, Orlando Gomes, dipukuli babak-belur dengan tongkat, dan kemudian ditikam sampai mati oleh para milisi.[†] Tubuhnya dilaporkan dikuburkan di dalam sebuah selokan. Sisa jasadnya di kemudian hari diangkat dan dikuburkan kembali di tempat yang dekat dengan Pusat Pemungutan Suara.

Orang ketiga, Alvaro Lopes, juga diserang ketika sedang membawa sebuah kotak suara ke kendaraan PBB. Ia mengalami luka berat tetapi jiwanya selamat. Menurut laporan PBB yang dikutip di atas, anggota TNI João da Costa pertama menangkap lengan Alvaro dan kemudian menikamnya. Pisau masuk ke bagian sisi kiri bawah punggungnya dan tembus ke sisi kanan bawah rusuknya. Ia kemudian diseret ke sebuah pojok dan ditinggalkan di sana oleh para milisi yang tampaknya menganggapnya sudah meninggal. Ketika para milisi akhirnya pergi, ayah Alvaro mengambil Alvaro dan membawanya ke pergunungan, di mana ia merawat Alvaro dengan obat-obatan tradisional.

Satu penyelidikan UNAMET yang dilakukan pada hari selanjutnya menemukan bahwa perwira-perwira dan prajurit TNI secara langsung terlibat dalam serangan, dan bahwa yang lain telah menyetujui serangan tersebut. Penyelidikan itu juga mengungkapkan motivasi politik yang jelas di balik pembunuhan dan memberikan banyak bukti tentang ketakmemadai tindakan Polri dan TNI untuk menangani insiden tersebut. Pengamatan ini dicantumkan dalam satu laporan internal UNAMET, bertanggal 31 Agustus, yang mencatat hal-hal penting dari kunjungan penyelidikan UNAMET ke Atsabe pada hari itu.[‡]

* UNAMET, HF pesan e-mail dari Ermera ke HQBPG, 30 Agustus 1999, Subject: "Murder of Locally Employed UNAMET Staff." Dicitak ulang dalam UNTAET, Political Affairs, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

† UNTAET, DHRO-Ermera, "Report on Human Rights Violations During 1999: Ermera District," [Maret 2000] halaman 28-39.

‡ UNAMET, Political Affairs Office, "Notes on Atsabe Investigation, 31 August 1999," dicetak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999. Untuk keterangan dari tangan pertama tentang kunjungan tersebut lihat Geoffrey Robinson, "The Fruitless Search for a Smoking Gun:

Mengenai persoalan keterlibatan TNI, laporan ini mencatat bahwa seorang perwira Polisi Sipil PBB telah bersaksi secara tertulis bahwa anggota-anggota TNI secara langsung terlibat dalam serangan di Boboe Leten. Laporan ini juga memberikan perhatian pada bukti persetujuan dan keterlibatan Komandan Rayon Militer (Danramil) dalam serangan tersebut. Sejumlah staf UNAMET menyaksikan, misalnya, bahwa kendaraan Kijang biru gelap yang dikendarai Danramil pada 31 Agustus adalah kendaraan yang sama dengan yang digunakan untuk membawa milisi ke tempat kejadian serangan. Lebih jauh, menurut laporan ini, Danramil mengaku kepada para pegawai UNAMET bahwa dirinya telah mengetahui rencana untuk menyerang UNAMET pada 30 Agustus, tetapi tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Menurut laporan ini, Danramil:

“... mengungkapkan tidak adanya penyesalan atas kekerasan di malam sebelumnya, tetapi justru berusaha membenarkannya dengan alasan bahwa ‘masyarakat’ marah terhadap UNAMET yang bersikap tidak netral. Ia menyampaikan bahwa dirinya sudah mendapat laporan akan terjadinya suatu serangan terhadap personel UNAMET pada 30 Agustus, dan bahwa dirinya telah mengatakan kepada milisi agar tidak melukai staf internasional UNAMET. Ketika [pejabat UNAMET] bertanya mengapa ia tidak berusaha mencegah serangan itu seluruhnya, Danramil berkata bahwa jika ia campurtangan, milisi akan berbalik melawan dirinya.”

Mengenai motivasi di balik serangan, laporan tersebut menegaskan bahwa milisi bertindak dengan tujuan politis. Dikemukakan bahwa, dalam satu pembicaraan dengan para pejabat UNAMET pada 31 Agustus, “pemimpin milisi mengatakan bahwa orang-orangnya telah membunuh Tuan Lopes karena staf UNAMET tidak netral dan telah ‘memaksa’ masyarakat untuk tidak memilih otonomi. Ia juga mengatakan bahwa, oleh karena alasan yang sama, orang-orangnya tidak akan membiarkan kotak-kotak suara atau staf lokal UNAMET pergi.”[†]

Akhirnya, mengenai tindakan pihak berwajib terhadap insiden tersebut, laporan UNAMET menggambarannya sebagai “sepenuhnya tidak memadai” dan mengajukan pengamatan berikut mengenai perilaku pihak berwajib selama kunjungan UNAMET ke Atsabe pada 31 Agustus:

“Tim pertama, yang tiba di Atsabe sekitar pukul 7, mendapati korban meninggal, João Lopes, dibaringkan di rumah Polisi Sipil PBB, ditemani keluarganya yang berduka, dan rumah itu

Tracing the Origins of Violence in East Timor,” dalam Freek Columbijn dan J. Thomas Lindblad (penyunting), *Roots of Violence in Indonesia*, Leiden: KITLV Press, 2002, halaman 263 dan 267

* UNAMET, Political Affairs Office, “Notes on Atsabe Investigation, 31 August 1999.” Dicitak ulang dalam UNTAET, Political Affairs Office, *Briefing Book*, Dili, November 1999.

† Ibid.

dikelilingi oleh sekitar 50 orang anggota milisi bersenjata ... Pembicaraan yang panjang dengan kepala kepolisian setempat (Kapolsek) dan seorang Perwira Penghubung Polisi di Polres Ermera menghasilkan jaminan bahwa milisi akan dibubarkan dan dikendalikan, tetapi tidak ada tindakan yang diambil, dan milisi tetap mempertahankan kehadirannya dengan bersenjata di wilayah sekitar rumah Polisi Sipil PBB ... Menanggapi permintaan UNAMET yang berulang-ulang agar milisi diminta bubar, ia menjelaskan bahwa ia tidak berani mengajukan permintaan semacam itu.”

Demikian juga, laporan ini mengemukakan, Danramil “menolak memberikan jaminan agar milisi dikendalikan, apalagi ditangkap.”

Satu delegasi tingkat tinggi TNI dan Polri dari Dili dan Ermera yang tiba kemudian di siang hari tanggal 31 Agustus berhasil meyakinkan milisi untuk membiarkan kotak-kotak suara dan staf lokal pergi. Namun, bahkan delegasi tersebut—termasuk Kolonel Polisi Made Pastika dari Dili, serta Dandim dan Kapolres dari Ermera—tidak mampu atau tidak mau mengamankan akses UNAMET ke tempat kejadian. Menurut laporan UNAMET ini, “Para pejabat militer dan kepolisian ... terus bersikeras mengatakan bahwa keamanan tidak dapat dijamin, dan tidak mau menggunakan wewenangnya untuk memungkinkan dilakukannya kunjungan.”[†]

Penyelidikan-penyelidikan dan pendokumentasian lebih lanjut telah membuktikan pengamatan awal ini, sekaligus menambah beberapa perincian penting. Penyelidikan-penyelidikan telah menemukan saksimata yang bisa mengidentifikasi nama-nama para penyerang. Secara signifikan, mereka yang disebut namanya mencakup empat orang yang diduga agen intelijen militer SGI dan tiga anggota reguler TNI.[‡] Bukti ini menambah bobot kesimpulan bahwa TNI terlibat secara langsung di dalam pembunuhan-pembunuhan ini.

Satu laporan rahasia militer tentang serangan tersebut, bertanggal 31 Agustus dan ditandatangani oleh Dandim Ermera, tidak memberikan bukti keterlibatan langsung TNI, tetapi mengungkapkan besarnya kecenderungan para perwira TNI untuk menerima atau mungkin berbagi pandangan dan penafsiran dengan milisi tentang kejadian-kejadian yang sudah berlangsung. Misalnya, penjelasan yang diberikan dalam laporan ini tentang pembunuhan-pembunuhan pada 30 Agustus sama dengan penjelasan yang diberikan pemimpin milisi kepada UNAMET pada 30 Agustus. Penjelasan dalam laporan ini menyebutkan: “Pada 30 Agustus 1999 pukul

.....
* Ibid.

† Ibid.

‡ Mereka yang diduga sebagai agen SGI adalah: Manuel Gonçalves, Antónino Beremau, Miguel Gonçalves, dan Manuel Halimau. Tiga anggota TNI yang disebut adalah: João da Costa, Laurindo, dan Domingos de Deus Soares. UNAMET, DHRO-Ermera, Report on 1999, halaman 29-30.

17.00 WITA melihat kecurangan staf lokal UNAMET menimbulkan kemarahan masyarakat pro-otonomi, sehingga melakukan penganiayaan terhadap staf lokal UNAMET tersebut ...”

Pemindahan paksa dan pembunuhan pengungsi di Dili (5-6 September 1999)

Karena ketakutan akan meningkatnya kekerasan, dalam hari-hari setelah pemungutan suara 30 Agustus banyak penduduk Dili melarikan diri ke bukit-bukit yang mengitari kota itu atau mencari tempat-tempat perlindungan di dalam kota. Pada 5 dan 6 September, tempat-tempat perlindungan ini diserang sekelompok besar milisi dan juga personel TNI dan Polri. Tempat-tempat itu sendiri dihancurkan dan dibakar, banyak pengungsi terluka berat, dan sedikitnya 17 orang dibunuh.[†]

Kisah-kisah yang disampaikan para saksi mata menunjukkan bahwa serangan-serangan ini bukanlah serangan acak yang dilakukan oleh segerombolan milisi pencoleng yang berniat balas dendam, melainkan suatu operasi yang direncanakan dengan baik yang dimaksudkan untuk meneror pengungsi dan memaksa mereka pindah ke Timor Barat. Dalam pengertian tersebut, serangan-serangan tersebut merupakan contoh yang jelas dari metode-metode yang digunakan oleh pasukan keamanan dan milisi di seluruh Timor-Leste untuk pemindahan paksa sekitar 400.000 orang di hari-hari dan minggu-minggu setelah pemungutan suara.

Serangan pertama terjadi di Keuskupan Dili, tempat sekitar 300 orang mencari perlindungan di hari-hari sebelumnya. Sekitar tengah hari pada 5 September, sebanyak 50 orang anggota milisi Aitarak bersenjata mulai menyerang pengungsi di sana dan menghancurkan serta membakar bangunan-bangunan di kompleks tersebut. Serangan berlanjut sampai senja hari. Sejumlah besar personel TNI dan Polri ada di tempat kejadian selama penyerangan, tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan, atau menghentikannya ketika serangan itu berlangsung. Yang terjadi justru sebagian anggota TNI dan Polri turut serta di dalam serangan tersebut.

Serangan berlangsung dalam dua tahap. Pertama, semua pengungsi dipaksa keluar dari kompleks dan menyeberang jalan menuju pelabuhan Dili. Kemudian, laki-laki dipisahkan dari perempuan dan anak-anak, dan selanjutnya diinterogasi serta dipukuli. Mereka yang diyakini sebagai mahasiswa, staf UNAMET, atau anggota CNRT dipisahkan untuk mendapatkan perlakuan yang lebih keras. Jumlah tepat korban tidak diketahui. Namun, para penyelidik telah menetapkan identitas lebih daripada 20 orang yang dijadikan sasaran tindakan tidak berperikemanusiaan selama serangan, dan sedikitnya 15 orang dibunuh atau dihilangkan.

* Telegram rahasia dari Dandim Ermera (Letnan Kolonel Muhammad Nur) Kepada Danrem 164/WD (Kolonel Noer Muis), No. TR/148/1999, 31 Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #42).

† Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan ini didasarkan pada: East Timor, Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Eurico Guterres et al., Dili, 27 Februari 2003.

Ketika serangan terhadap Keuskupan Dili dimulai, beberapa pejabat paling senior militer, kepolisian, dan pemerintah sipil Indonesia sedang rapat di rumah Komandan Korem Timor Timur, Kolonel Noer Muis, yang berada dua kilometer dari tempat kejadian.* Menurut seorang asisten Uskup Belo, Manuel Abrantes, yang hadir dan mencatat isi rapat itu, Uskup Belo secara tegas meminta Jenderal Wiranto untuk menginstruksikan para komandan TNI dan Polri di Timor-Leste agar mengendalikan milisi.† Setelah berdiskusi beberapa lama, dan muncul penentangan jelas dari panglima tertinggi milisi, João Tavares, Uskup mengulangi permintaannya. Kali ini Jenderal Wiranto menjawab “Ya, Bapak Uskup.”* Namun, kejadian-kejadian di hari selanjutnya menunjukkan bahwa perintah seperti itu tidak pernah dikeluarkan atau perintah dikeluarkan tetapi diabaikan. Dalam waktu hanya beberapa jam kemudian di pagi hari 6 September, tiga tempat pengungsian utama di Dili diserang oleh anggota milisi bersenjata.

Salah satu sasaran adalah Biara Canossiana tempat sekitar 100 orang dan sembilan suster berlindung. Milisi menyeret mereka semua keluar dari kompleks biara, menyerang seorang suster, dan kemudian menghancurkan sebagian besar barang di dalam biara. Sasaran kedua adalah kompleks Komite Palang Merah Internasional (ICRC), tempat diperkirakan 2.000 orang berkumpul pada hari-hari setelah pemungutan suara. Dengan menembak-nembakkan senjata dan berteriak-teriak, anggota-anggota milisi memaksa para pengungsi keluar ke jalan, dan orang-orang yang dicurigai sebagai aktivis prokemerdekaan dipisahkan dari yang lain sebelum digiring pergi. Seperti dalam kasus Keuskupan Dili, personel TNI dan Polri mengambil bagian dalam serangan ini atau gagal bertindak mencegah serangan tersebut.

Serangan terhadap sekitar 5.000 orang yang mencari perlindungan di kediaman Uskup Belo merupakan kejadian yang paling luas diliput dan didokumentasikan secara menyeluruh dari tiga serangan pada 6 September. Lebih daripada 15 orang menderita luka parah dalam serangan ini, sedikitnya satu orang dibunuh, dan rumah Uskup dihancurkan hingga menjadi puing yang membara.

Serangan didahului dengan tanda-tanda buruk adanya keterlibatan pihak berwenang. Di awal pagi hari 6 September, Uskup Belo menghubungi Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Timbul Silaen, untuk meminta bantuan

* Para pejabat militer, kepolisian, dan pemerintah sipil yang hadir pada rapat tanggal 5 September mencakup: Panglima TNI, Jenderal Wiranto; Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung; Panglima Daerah Militer IX, Mayor Jenderal Adam Damiri; perwira Satuan Tugas, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim; Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (dan tidak lama kemudian menjadi Penguasa Darurat Militer), Mayor Jenderal Kiki Syahnakri; Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Timbul Silaen; dan Komandan Resor Militer Timor Timur, Kolonel Noer Muis. Beberapa tokoh pro-otonomi terkemuka termasuk João Tavares dan Francisco Lopes da Cruz juga hadir. Lihat: Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Eurico Guterres et al., Dili, 27 Februari 2003.

† Kesaksian Manuel Abrantes, direkam dan dikumpulkan di Brisbane, Australia, 26 November 1999.

‡ Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 6.

perlindungan dan mungkin mengevakuasi pengungsi. Kolonel Silaen disebutkan mengatakan bahwa dirinya tidak dapat membantu, dan menyarankan Uskup untuk menghubungi Komandan Resor Militer Timor Timur, Kolonel Noer Muis. Uskup kemudian menelepon Kolonel Muis, yang juga mengatakan tidak dapat membantu. Sekitar pukul 09.00 seorang perwira Kostrad yang tidak teridentifikasi tiba di kediaman Uskup untuk berbicara dengan Uskup. Perwira itu mengatakan kepada Uskup bahwa ia bermaksud melindungi diri Uskup dan tempat kediamannya, dan ia meminta Uskup untuk menelepon jika terjadi sesuatu. Ia kemudian pergi. Sekitar 15 menit kemudian, milisi mulai berdatangan.

Kelompok pertama terdiri atas 20 orang yang bertelanjang dada tidak mengenakan kaos oblong, tiba dengan mengendarai sepeda motor. Mereka disusul oleh banyak yang lain dengan mengendarai sejumlah mobil Kijang dan truk bak terbuka berwarna kuning. Mereka yang berada di dalam truk mengenakan ikat kepala merah putih. Seluruhnya ada lebih daripada 100 orang anggota milisi. Ketika mereka berkumpul, para milisi berteriak melecehkan para pengungsi di dalam, dengan menyebut mereka “Anak-anak pelacur”, dan mengancam “Kami akan bunuh kalian; kami tahu kalian prokemerdekaan!” Beberapa dilaporkan berteriak “Cukimai!” dan “Kalian makan tahi kalian sendiri kalau mau merdeka!”

Serangan kemudian dimulai dengan cara yang tampak terkoordinasi. Milisi mulai mengelilingi kompleks kediaman Uskup, yang dikitari oleh jalanan di semua sisinya. Pada putaran pertama, mereka menembakkan pistol, senjata otomatis, dan senapan rakitan ke dalam kompleks, memecahkan jendela-jendela, dan mengakibatkan sejumlah orang terluka. Pada putaran kedua, mereka melemparkan alat-alat peledak bakar (bom Molotov) ke dalam kompleks. Beberapa dari alat-alat peledak itu masuk ke rumah kediaman Uskup dan dalam waktu singkat rumah itu terbakar.[†]

Sementara itu banyak milisi yang bersenjatakan pedang dan senapan memasuki kompleks dan mulai menangkapi para pemuda sambil berteriak agar yang lain pergi. Orang-orang berteriak dan menangis, dan sejumlah orang terluka parah. Di antara mereka adalah seorang anak perempuan berusia tujuh tahun, yang kehilangan mata kirinya ketika dihantam oleh peluru nyasar, dan seorang anak laki-laki yang tertembak di belakang kepalanya.[‡]

Menurut surat dakwaan yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat, personel TNI dan Polri secara aktif berpartisipasi di dalam serangan. Secara lebih spesifik, surat dakwaan itu menyatakan bahwa:

“... anggota-anggota TNI dan Brimob memasuki kompleks dengan menembakkan senjata otomatis, menyerang pengungsi, dan memerintahkan mereka keluar. Anggota-anggota POLRI memasuki

.....
* Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 8.

† Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 9.

‡ Anak perempuan itu adalah Liliana Trindade.

kompleks dan memerintahkan agar pengungsi keluar. Salah seorang anggota POLRI menyulut api di rumah Uskup Belo dengan sejumlah kaleng bensin.”

Akhirnya, para pengungsi berhasil keluar ke Travessa Lecidere, satu lapangan yang bersebelahan dengan kompleks kediaman Uskup. Unit-unit Polri dan TNI, dan setidaknya seorang perwira TNI, ada di sana selama operasi ini berlangsung.[†] Manuel Abrantes, yang berada di sana, menggambarkan kejadian ini:

“Ketika orang-orang meninggalkan kompleks, unit-unit Kostrad dan Polri muncul, termasuk Komandan Kostrad. Ketika kami diarahkan milisi ke Travessa Lecidere, para anggota milisi mengatakan, ‘Jangan bicara, jangan berteriak. Kalau kalian berteriak, kami akan bunuh kalian.’ Senjata-senjataapi diarahkan kepada kami oleh milisi, Polri, dan Kostrad.”[‡]

Di tengah kekacauan, Uskup meninggalkan kompleks kediamannya untuk berbicara dengan komandan Kostrad yang sebelumnya menawarkan bantuan. Setelah berbicara beberapa saat dengan komandan tersebut dan sejumlah perwira Polri, Uskup dibawa pergi. Awalnya Uskup dibawa ke kantor Kepolisian Daerah (Polda), kemudian diangkut dengan helikopter ke kota Baucau, di mana ia bergabung dengan Uskup Nascimento.

Sementara itu, di kompleks kediaman Uskup di Dili, lima atau enam anggota milisi menginterogasi sekumpulan pengungsi. Seorang pemimpin milisi, yang bersenjatakan sepucuk pistol dan sebuah granat dan mengenakan bendera Indonesia di kepalanya, mendesak untuk mengetahui apakah para pengungsi mendukung kemerdekaan atau integrasi. Para pengungsi berteriak bahwa mereka mendukung integrasi. Masih tetap dengan mengacungkan senjatanya, pemimpin milisi mendesak mereka untuk memberitahukan keberadaan anggota-anggota CNRT, menyebutkan nama dua pemimpin (Leandro Isaac dan Manuel Carrascalão). Saat interogasi sedang berlangsung, datang lagi beberapa orang milisi. Rombongan milisi yang baru, tampaknya BMP dari Liquiçá, memakai baret merah dan seragam tentara yang mirip dengan yang dipakai pasukan Kopassus.[§]

Pada sekitar pukul 13.00, komandan milisi memerintahkan pengungsi untuk mengumpulkan barang-barang mereka dan pergi ke markas Kepolisian Daerah

* Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Eurico Guterres et al., Dili, 27 Februari 2003, halaman 14.

† Seorang mantan informan SGI, Francisco Kalbuadi, mengatakan bahwa ia melihat Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin (Asisten Teritorial Kepala Staf Umum TNI) di tempat kejadian, dengan pakaian sipil, sedang mengarahkan operasi dari luar kompleks keuskupan tersebut. Syamsudin menolak tuduhan, dengan menyatakan bahwa pada saat itu ia berada di markas besar TNI di Jakarta. Lihat “Sjafrie Mengaku Berada di Mabes TNI,” *Kompas*, 30 Desember 1999.

‡ Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 10.

§ Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 13.

(Polda) di bagian lain kota. Menurut Manuel Abrantes, komandan milisi mengancam pengungsi, dengan mengatakan bahwa jika mereka tidak pergi ke kantor polisi tersebut, “Kami akan bunuh kalian dan tidak akan bertanggung jawab.” Beberapa dari pengungsi berhasil melarikan diri ke arah pergunungan, tetapi sejumlah besar yang takut kehilangan nyawa, bergerak ke markas Polda yang berjarak tiga kilometer. Setelah satu masa penantian, mereka diangkut ke truk-truk dan dibawa ke Timor Barat untuk bergabung dengan 250.000 orang lain di pengasingan.

Pembantaian di Gereja Suai (6 September 1999)

Kabupaten Covalima merupakan tempat kejadian pelanggaran hak asasi manusia yang luas baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara 1999. Satu insiden terburuk di Kabupaten Covalima, dan yang paling buruk di seluruh Timor-Leste, adalah pembantaian di Gereja Ave Maria di kota Suai pada 6 September 1999.[†]

Sedikitnya 40 orang, tetapi mungkin juga mencapai 200 orang, dibunuh dalam pembantaian ini.[‡] Dari 40 korban tersebut yang sudah diketahui identitasnya sampai akhir tahun 2002 adalah tiga orang pastor Katolik, sepuluh orang korban berusia di bawah 18 tahun, dan lebih daripada selusin orang perempuan. Mereka yang meninggal termasuk di antara 1.500-2.000 orang yang, karena meningkatnya kekerasan dan intimidasi milisi dan pasukan keamanan, mengungsi di gereja lama, di dalam tempat kediaman Pastor di sebelah gereja, dan di dalam gereja baru yang belum selesai dibangun yang berjarak beberapa ratus meter dari gereja lama.

Para pelaku utama pembantaian di gereja Suai dan kekerasan secara umum di Covalima pada 1999 adalah para anggota kelompok milisi utama Kabupaten Covalima, Laksaur, yang dipimpin Olivio Mendonça Moruk. Sebagian pelaku juga merupakan anggota dari kelompok milisi yang bermarkas di Ainaro, Mahidi, yang dipimpin oleh Cancio Lopes de Carvalho. Tetapi milisi tidak beroperasi sendiri. Seperti di kabupaten-kabupaten lain, mereka dibentuk, dilatih, dipasok, dan dibina oleh perwira-perwira TNI. Mereka juga mendapatkan dukungan keuangan dan politik dari pemerintah sipil, dan dukungan atau persetujuan dari Polri dan Brigade Mobil di kabupaten ini.

.....
* Kesaksian Manuel Abrantes, halaman 12.

† Penjelasan ini dikumpulkan dari berbagai sumber, mencakup: UNMISSET, DHRO-Covalima, “Covalima District: 1999 Report”; Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur (KPP-HAM), Januari 2000; James Dunn, “Crimes Against Humanity in East Timor, January to October 1999 – Their Nature and Causes,” Februari 2001; Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Col. Herman Sedyono et al., Dili 7 April 2003; beberapa pernyataan saksi yang direkam dan dikumpulkan oleh para penyelidik PBB di Timor Timur antara 1999 dan 2002; dan liputan media terpilih tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Jakarta.

‡ KPP-HAM memperkirakan 50 orang yang dibunuh, sementara organisasi hak asasi manusia di Timor-Leste, Yayasan HAK memperkirakan antara 50 sampai 200 orang dibunuh. Surat dakwaan yang diajukan untuk kasus ini menyebutkan “antara 27 dan 200 penduduk sipil telah dibunuh selama serangan terjadi.” Lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Egidio Manek et al., Dili, 28 Februari 2003, halaman 232.

Para pejabat yang paling bertanggung jawab langsung atas pengendalian milisi di Covalima, dan bertanggung jawab langsung atas pembantaian di gereja Suai, adalah Bupati, Kolonel Herman Sedyono; Dandim, Letnan Kolonel Liliiek Koeshadianto (alias Lilik Kushadiyanto), Kepala Kepolisian Resor Covalima, Letnan Kolonel (Pol.) Gatot Subiaktoro, dan Komandan Rayon Militer Suai, Letnan Sugito. Keempat orang tersebut terlihat membawa senjata di tempat kejadian pembantaian dan semuanya diduga ambil bagian di dalam serangan.*

Walaupun tidak dilaporkan berada di tempat kejadian pada saat serangan, dua perwira militer lainnya diduga turut bertanggung jawab atas pembantaian ini karena peran langsung mereka dalam memobilisasi dan mengoordinasi kegiatan milisi di Kabupaten Covalima. Mereka adalah Komandan Distrik Militer sampai akhir Agustus, Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus, dan seorang bintanga intelijen TNI, Sersan Yus Nampun.

Pembantaian 6 September didahului ketegangan dan kekerasan selama beberapa bulan di kota Suai, yang sebagian besar terpusat pada para pengungsi dalam negeri di gereja. Para pengungsi pertama kali tiba di gereja itu pada awal 1999, setelah terjadi pembunuhan terhadap beberapa pemimpin CNRT dan serangkaian serangan milisi terhadap desa-desa yang dianggap sebagai basis kelompok prokemerdekaan. Satu kelompok pengungsi yang terdiri atas sekitar 300 orang pergi ke gereja di akhir Juni setelah para pejabat UNAMET memfasilitasi kembalinya mereka ke Suai dari tempat-tempat pengungsian mereka di gunung-gunung. Selama masa ini, milisi, Bupati, dan para pemimpin pro-otonomi lainnya, bersikap bermusuhan terhadap para pengungsi dalam negeri, dan terhadap para pastor dan suster yang memberi mereka tempat berlindung.

Dengan diumumkannya hasil pemungutan suara pada 4 September, milisi dan TNI memulai kekerasan yang segera berpusat pada para pengungsi dalam negeri di gereja. Pada 4 September itu, para anggota milisi Laksaur mulai mengancam, memukuli, dan membunuh penduduk di Desa Debos, di kota Suai, dan kemudian menjarah dan membakar rumah-rumah penduduk. Beberapa penduduk menyelamatkan diri ke wilayah perbukitan, sementara yang lain bergabung dengan ratusan pengungsi yang sudah berlindung di gereja. Sedikitnya tiga orang dibunuh. Pada 5 September, pasukan TNI, termasuk Danramil Suai, Letnan Sugito, bergabung dengan milisi membakar, menjarah, dan menembakkan senjata mereka di wilayah sekitar gereja. Pada hari itu, setidaknya satu orang lagi ditembak mati oleh milisi Laksaur, dan aliran pengungsi terus meningkat.

Dimulai sekitar pukul 08.00 pagi hari berikutnya, 6 September, para komandan milisi Laksaur mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwira TNI, pertama di Koramil Salele, yang juga berfungsi sebagai markas milisi di wilayah tersebut, dan kemudian di Kodim di Suai. Setelah pertemuan di Koramil Salele, para anggota

.....
* Lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Col. Herman Sedyono et al., Dili, 7 April 2003, halaman 42. Herman Sedyono mengakui di pengadilan di Jakarta bahwa ia berada di gereja tersebut selama pembantaian, tetapi mengaku bahwa ia berusaha menghentikan kekerasan. Lihat AP, 30 Juli 2002.

milisi Laksaur diberitahu bahwa mereka akan menyerang gereja Suai pada hari itu. Sekitar pukul 10.00, para anggota milisi Laksaur dan Mahidi yang bersenjatakan parang, pedang, dan senjataapi mulai berkumpul di sekitar kompleks gereja, sambil mengancam dan mengejek para pengungsi yang berada di dalam. Menurut para saksi, seorang anggota milisi memasuki kompleks dan berkata kepada salah seorang pastor (Pastor Hilario Madeira) bahwa truk-truk akan segera tiba untuk mengangkut para pengungsi ke Timor Barat. Selanjutnya pada hari yang sama, para prajurit TNI dan unit-unit Brigade Mobil tiba dan mengambil posisi di sekitar gereja.

Sementara itu, komandan-komandan Laksaur dan beberapa anggota milisi telah berkumpul di rumah Bupati, Herman Sedyono. Mereka bersenjatakan senapan, pedang, dan parang. Sekitar pukul 14.30, para anggota milisi meninggalkan rumah bupati dan bergerak menuju gereja. Bupati, yang mengenakan seragam TNI dan bersenjatakan sepucuk senapan, mengikuti mereka ke gereja dengan menggunakan mobil.

Di dalam gereja, kecemasan terus meningkat. Telah ada sejumlah peringatan akan adanya penyerangan terencana. Salah satunya datang dari seorang milisi yang memasuki kompleks pengungsian di pagi hari untuk mencari keponakannya, dan mendesak agar para pengungsi pergi selagi mereka bisa. Peringatan-peringatan lain datang melalui telepon. Ketua DPRD Kabupaten menelepon gereja untuk menawarkan bantuan untuk membawa pengungsi ke tempat yang aman. Akhirnya, sekitar pukul 12 siang, para pastor mulai mendesak para pengungsi untuk mengemasi barang-barang mereka dan bersiap pergi. Ratusan laki-laki muda, yang dianggap kemungkinan dijadikan sasaran serangan, beranjak pergi tetapi sebanyak 1.500 orang, sebagian besar dari mereka, perempuan dan anak-anak, tetap berada di dalam gereja.

Segera setelah pukul 14.30 serangan dimulai. Menurut para saksi, dua buah granat dilemparkan dan kemudian milisi dan TNI mulai menembakkan senjatanya ke dalam kompleks gereja. Serangan berlangsung selama sekitar tiga jam. Para saksi mata dan jaksa penuntut mengatakan bahwa sejumlah pejabat tinggi berada di tempat kejadian sepanjang serangan itu dan ambil bagian di dalam serangan. Mereka mencakup: Bupati, Kolonel (Purn.) Herman Sedyono; Dandim, Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto; Kepala Kepolisian Resor, Letnan Kolonel (Pol.) Gatot Subiaktoro; dan Danramil Letnan Sugito.*

Yang pertama memasuki gereja adalah sejumlah anggota milisi Laksaur dan Mahidi, bersenjatakan parang, pedang, pisau, dan senjataapi rakitan. Di belakang mereka ada kelompok campuran prajurit TNI dan anggota milisi. Menurut para saksi, anggota milisi pertama-tama bergerak menuju ke bangunan tempat tinggal pastor dan tempat tinggal suster, yang bersebelahan dengan gereja lama. Ketika mereka bergerak masuk mereka membacok, menikam, dan menembak sebanyak

* Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Col. Herman Sedyono et al., Dili, 28 Februari 2003, halaman 42. Surat dakwaan ini juga menyebutkan nama 14 orang personel TNI yang ambil bagian dalam pembunuhan di gereja tersebut.

mungkin orang yang ada di jalur gerak mereka. Di luar kompleks gereja, menurut para saksi, unit-unit TNI dan Brigade Mobil berbaris mengepung dalam jarak tertentu dari mana mereka menembak orang-orang yang melarikan diri dari kekacauan di dalam.

Beberapa saksi melaporkan bahwa mereka mendengar ada tiga sampai lima ledakan besar, yang mereka yakini sebagai ledakan granat, pada saat serangan. Seorang saksi, yang bersembunyi di dalam tempat tinggal pastor, mengatakan bahwa sebuah granat dilemparkan ke kamar Pastor Hilario. Ruangan itu lalu diberondong dengan tembakan senapan otomatis.

Di antara orang-orang yang pertama dibunuh terdapat tiga orang pastor, yaitu Pastor Hilario Madeira, Pastor Francisco Soares, keduanya orang Timor-Leste, dan Pastor Tarsisius Dewanto, orang Indonesia. Kejadian pembunuhan mereka yang sebenarnya masih tidak jelas, tetapi pernyataan-pernyataan para saksi menunjukkan bahwa mereka dengan jelas bisa dikenali sebagai pastor pada saat pembunuhan mereka. Bagaimanapun, ketiganya dikenal masyarakat Suai, dan mereka dibunuh di dalam atau di dekat tempat tinggal pastor di gereja lama, sehingga tidak mungkin ada keraguan mengenai identitas mereka.

Para saksi sama mengatakan bahwa Pastor Hilario ditembak dan juga ditikam atau dibacok oleh seorang milisi Laksaur (Egidio Manek) saat ia muncul dari ruangnya di bangunan tempat tinggal pastor. Seorang saksi menyatakan bahwa ia melihat mayat Pastor Hilario tergeletak di lantai ruang duduk di dalam rumahnya. Pastor Francisco juga dikatakan ditikam dan dibacok sampai mati oleh seorang milisi Laksaur (Americo) di dekat tempat tinggalnya. Menurut pernyataan salah seorang saksi, sesaat sebelum dibunuh ia memohon kepada para penyerangnya untuk membebaskan perempuan dan anak-anak. Pastor Dewanto, pastor Indonesia, dilaporkan dibunuh oleh tembakan di dalam atau di dekat gereja lama. Salah seorang saksi mengatakan bahwa ketika Pastor Dewanto akan dibunuh, seorang penyerang berteriak "Jangan bunuh dia! Dia orang kita!" Tetapi peringatan datang terlambat.

Sekitar pukul 17.00 pembunuhan akhirnya berhenti. Sejumlah besar dari mereka yang selamat, beberapa darinya adalah perempuan, dikeluarkan dari kompleks gereja oleh para prajurit TNI dan milisi. Ketika mereka berjalan, mereka diperintahkan untuk tidak melihat sekeliling mereka, tetapi mereka mau tidak mau melihat mayat-mayat bergelimpangan di sekitar kompleks gereja. Seorang saksi mengatakan bahwa darah mengalir seperti arus panjang dari dalam gereja, melintasi kompleks gereja dan mencapai jalan di luar. Dari gereja, orang-orang yang selamat dibawa ke markas Kodim dan ke sebuah sekolah dasar yang ada di dekatnya, di mana mereka diinterogasi. Beberapa dari mereka ditahan di sana selama delapan hari, dan setidaknya seorang perempuan dilaporkan diserang secara seksual oleh seorang milisi ketika berada di dalam penahanan.*

* Laporan ini dibuat oleh ayah korban. Ia mengidentifikasi anggota milisi tersebut sebagai Alipio.

Pagi-pagi sekali di hari selanjutnya, 7 September, para pemimpin TNI dan milisi mempersiapkan pembuangan mayat dan penghancuran sebanyak mungkin bukti. Menurut salah satu surat dakwaan yang diajukan untuk kasus ini, orang-orang yang secara langsung terlibat dalam usaha pembuangan jasad korban mencakup mantan Dandim, Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus dan Danramil Suai Letnan Sugito.^{*} Sedikitnya 27 mayat, dan mungkin lebih banyak lagi, dilemparkan ke atas truk-truk (jenis, warna, dan nomor registrasinya diketahui) dan dibawa ke luar kota, menyeberangi perbatasan ke Timor Barat.

Seorang anggota Polri yang bertugas di Mettamauk, Wemasa, Timor Barat mengatakan kepada para penyelidik bahwa truk-truk yang mengangkut mayat berhenti di pos Polri tempatnya bertugas sekitar pukul 08.30 tanggal 7 September.[†] Saksi ini melihat bahwa Letnan Sugito, Danramil Suai, ada di dalam truk, dan mengatakan kepadanya bahwa yang mati berasal dari gereja di Suai. Saksi lain mengatakan bahwa ia melihat mayat-mayat itu dikuburkan di dekat pantai di Desa Alas Selatan di Kabupaten Belu, Timor Barat sekitar pukul 09.00 tanggal 7 September. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan penguburan dipimpin oleh Letnan Sugito dan mencakup tiga prajurit TNI dan satu peleton milisi Laksaur dari Suai.

Di akhir November 1999, para jaksa penyelidik Indonesia pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh para saksi dan menemukan tiga kuburan massal. Dari kuburan ini mereka mengangkat jenazah dari 27 orang, yang terdiri atas 16 orang laki-laki, delapan orang perempuan, dan tiga lainnya tidak bisa dikenali jenis kelaminnya. Di antara mayat-mayat yang diangkat terdapat mayat seorang anak berusia sekitar lima tahun, seorang pemuda yang kedua belah paha dan tulang pinggulnya hilang, dan seorang perempuan remaja yang telanjang dan tubuhnya telah dibakar.

Selain mayat-mayat yang dikuburkan di Timor Barat, dan mayat-mayat lain yang diduga dilemparkan ke laut, sejumlah besar mayat yang belum diketahui jumlahnya dilaporkan dikumpulkan menjadi satu di gereja Suai dan dibakar sampai tak dapat dikenali lagi. Para penyelidik yang mengunjungi tempat itu pada akhir tahun 1999 menemukan apa yang tampak seperti tulang dan tengkorak manusia yang hangus. Berdasarkan informasi ini, dan pernyataan-pernyataan yang dikumpulkan dari keluarga-keluarga dan pejabat-pejabat setempat, pada akhir 2002 para penyelidik hak asasi manusia PBB berhasil mengidentifikasi 40 orang yang telah meninggal di dalam pembantaian tersebut. Tetapi, perkiraan yang bisa dipercaya tentang jumlah yang meninggal berkisar sebanyak 200 orang.

* Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment against Egidio Manek et al., Dili, 7 April 2003, halaman 42.

† Perwira itu diidentifikasi sebagai Sersan Mayor (Pol.) Kanakadja, Kapolsek Mettamauk, Wemasa.

Pembantaian di Kantor Polisi Maliana (8 September 1999)

Di Kabupaten Bobonaro terjadi sejumlah pembunuhan massal pada September 1999. Sifat sistematis dari pembunuhan ini, kehadiran para perwira TNI dan Polri di tempat kejadian, serta usaha sengaja untuk menyembapkan mayat korban, semuanya merupakan bukti sangat kuat bahwa pembunuhan sudah direncanakan dan diorganisasikan oleh pihak berwenang Indonesia.

Pembunuhan massal yang paling terkenal dan yang paling mengungkapkan pertanggungjawaban pemerintah adalah serangan terhadap para pengungsi di Kepolisian Resor (Polres) di kota Maliana pada 8 September. Para korban adalah sebagian dari sekian ratus penduduk Maliana yang mencari tempat berlindung di kantor Polres ketika kota itu diguncang kekerasan setelah pemungutan suara 30 Agustus. Sebanyak 14 orang, beberapa di antaranya anak-anak, dibunuh dalam serangan tersebut.^{*} Selain itu, setidaknya 13 orang yang melarikan diri dari tempat kejadian dibunuh pada hari selanjutnya di dekat Mulau, dan dua orang lainnya dibunuh di atau dekat kantor Polres pada 10 September. Seluruhnya sekitar 71 orang dibunuh di Kecamatan Maliana saja dalam periode 2-29 September.

Kesaksian para saksi menegaskan bahwa pembantaian di kantor Polres Maliana dilakukan bersama oleh para prajurit TNI dari Kodim 1636 dan para anggota milisi DMP, di bawah pengawasan perwira-perwira TNI dan SGI.[†] Para saksi juga mengatakan bahwa pasukan Polri dan Brimob tidak bertindak apapun untuk mencegah serangan, menghentikannya ketika serangan sedang berlangsung, atau menangkap para pelaku ketika pembantaian sudah selesai.

Para perwira TNI yang secara langsung terlibat di dalam serangan antara lain: mantan Komandan Distrik Militer, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian, dan Kepala Seksi Intelijen Kodim Letnan Sutrisno. Letnan Kolonel Siagian rupanya sudah dilepaskan dari jabatannya pada pertengahan Agustus karena banyaknya bukti bahwa ia memberikan dukungan pada kekerasan milisi. Namun dalam kenyataannya, ia tidak pernah meninggalkan Maliana sepanjang minggu-minggu setelah pemindahannya. Walaupun ia mengenakan pakaian sipil sebagai ganti seragam TNI, ia terus bertindak dalam posisi komando selama periode tersebut. Dalam hari-hari menjelang pembantaian ia berulang kali terlihat berada di kantor Polres, di mana ia ambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dengan Kepala Polres dan pemimpin milisi João Tavares.

Pembantaian di kantor Polres didahului dengan beberapa hari meningkatnya kekerasan di dalam kota Maliana, dan dalam kejadian kekerasan tersebut beberapa orang dieksekusi, banyak yang diserang dan diancam, dan sekitar 80% dari semua bangunan

.....
^{*} Perkiraan yang lebih besar yang diumumkan dalam minggu-minggu dan bulan-bulan setelah pembantaian tampaknya menggambarkan jumlah orang yang dibunuh di wilayah tersebut pada sekitar waktu pembantaian, hanya beberapa dari mereka yang benar-benar dibunuh di kantor Polres.

[†] Ada tuduhan yang belum dikonfirmasi bahwa unsur-unsur dari Batalion Lintas Udara 700 Kostrad, yang dilaporkan ditempatkan di Maliana pada awal tahun 1999, juga terlibat.

yang dibakar atau dihancurkan. Para penduduk yang tidak bisa melarikan diri ke bukit-bukit mulai berkumpul di kantor Polres segera setelah pemungutan suara.

Salah seorang yang mengungsi dengan keluarganya adalah seorang mantan anggota Polri. Ia kemudian memberitahu para penyelidik bagaimana milisi bersenjata dan prajurit TNI datang ke desanya, Lahomea, menyebarkan pesan teror:

“Mereka semua mengepung desa dan mereka mengumumkan dalam bahasa Indonesia dan Tetum: ‘Karena kalian semua adalah pendukung kemerdekaan kami harus membunuh kalian semua.’ Kami takut bahwa mereka akan kembali dan melakukan apa yang mereka umumkan, maka saya dan keluarga saya bersama dengan kerabat kami mulai mengemas barang-barang kami dan pindah ke markas Polri di mana kami yakin kami akan mendapatkan perlindungan.”

Untuk sementara waktu, para pengungsi tampak aman di kantor Polres, namun ada tanda-tanda ancaman bahaya. Mulai dari 3 September, banyak anggota milisi dan prajurit TNI terlihat bergerak bebas keluar masuk kompleks kantor Polres, dan berkeliaran di antara para pengungsi.[†] Lebih jauh lagi, antara 3 dan 7 September, beberapa rapat berlangsung di kantor Polres yang dihadiri mantan Dandim, Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian; Kapolres, Mayor Budi Susilo; dan pemimpin protonomi João Tavares dan Natalino Monteiro.

Di pagi hari 7 September, kelompok ini mengadakan rapat terakhir di kantor Polres.[‡] Setelah rapat diakhiri, Kapolres dan wakilnya memberitahu para pengungsi bahwa mereka harus pindah ke satu tempat di belakang kompleks kepolisian, sepertinya untuk memberi ruang kepada para petugas Polri dan keluarga mereka.[§] Pihak penuntut menuduh bahwa instruksi ini merupakan satu tipuan yang dilakukan oleh para pejabat tersebut untuk mengonsentrasikan para pengungsi di satu tempat sebelum sebuah serangan terjadi, dan di tempat mereka dikelompokkan itulah para pengungsi terjebak dan dibunuh ketika serangan dimulai pada keesokan harinya.

Beberapa jam sebelum serangan, pada 8 September, puluhan milisi berkumpul di Koramil. Di sana mereka dibagi ke dalam empat kelompok dan mendapatkan petunjuk singkat tentang misi mereka dari para perwira TNI dan SGI. Dua kelompok ditugaskan membentuk pagar pengamanan di sekeliling kantor Polres. Dua kelompok lainnya ditugaskan mencari dan membunuh pemimpin-pemimpin prokemerdakaan yang berlindung di kompleks kantor Polres. Sebelum berangkat ke kantor Polres, wajah beberapa orang milisi dicat hitam oleh para prajurit SGI.

* Kesaksian tertulis oleh Manuel Gomes da Silva kepada UNAMET, 27 Oktober 1999.

† Seorang saksi memberikan daftar nama 38 orang milisi dan prajurit yang ia lihat berada di dalam kompleks tersebut selama periode ini. Dari 38 nama yang ada dalam daftar, 12 orang diidentifikasi sebagai prajurit TNI. Kesaksian Luis Cairo dalam satu kesaksian tertulis bersama mengenai pembunuhan terhadap Manuel Barros, 17 Maret 2000.

‡ Kesaksian tertulis bersama oleh Vicente dos Santos, Victor dos Reis, dan Luis Cairo, 17 Maret 2000.

§ Kesaksian tertulis bersama oleh Vicente dos Santos, Victor dos Reis, dan Luis Cairo, 17 Maret 2000.

Serangan dimulai pada sekitar pukul 17.30. Dua buah truk berhenti di depan kantor Polres dan tiga truk lainnya berhenti di sebatang jalan yang memanjang di sisi kompleks ini.^{*} Kendaraan-kendaraan ini dipenuhi dengan prajurit dan milisi, yang bersenjatakan parang, pisau, dan pedang. Banyak dari milisi berpakaian hitam dan mengenakan kedok “Ninja” atau bendera Indonesia untuk menutupi muka mereka. Para prajurit TNI, sebagian besar dari mereka mengenakan celana tempur dan kaus oblong hitam, membawa senapan otomatis dan pistol. Ketika kendaraan-kendaraan tersebut berhenti, para prajurit dan milisi melompat turun dan mengambil posisi di dalam dan di sekitar kompleks. Beberapa prajurit TNI menutup jalan utama di sepanjang depan kantor Polres, sementara yang lain membentuk pagar mengelilingi kompleks kantor.

Sementara itu banyak milisi dan prajurit TNI memasuki kompleks dari pintu masuk di samping dan berlari memasuki tempat para pengungsi berkumpul. Seorang saksi menggambarkan saat awal penyerangan:

“Saya melihat milisi berlarian ke segala arah, mengejar laki-laki dan anak laki-laki untuk membunuh mereka ... Para pengungsi berteriak ketakutan tetapi mereka tidak dapat melarikan diri karena milisi dan TNI semuanya mengurung tempat itu.”[†]

Dalam keadaan panik, banyak pengungsi yang lari ke pos keamanan di pintu gerbang depan kompleks, tetapi para prajurit Brimob di sana menyuruh mereka untuk kembali ke tenda mereka. Tidak semuanya melakukannya, tetapi mereka yang melakukannya kemudian menyaksikan serangan dimulai.

Di antara korban pertama adalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun, José Barros Soares, yang dibacok hingga mati oleh milisi sementara adik perempuannya melihat peristiwa itu.[‡] Namun kekerasan tidaklah seacak seperti yang tampak di tempat kejadian. Para penyerang jelas memilih tokoh-tokoh prokemerdakaan terkenal untuk dibunuh. Korban pembunuhan meliputi sejumlah pemimpin CNRT, serta seorang camat, dua orang kepala desa, dan beberapa pegawai negeri sipil.[§]

* Penjelasan berikut tentang serangan ini diambil dari kesaksian beberapa saksi mata, meliputi: saksi “FB-1” diwawancarai oleh UNAMET, 29 Oktober 1999; saksi “FG-1” diwawancarai oleh UNTAET, 12 November 1999; Manuel Gomes da Silva yang memberikan kesaksian kepada UNAMET, 27 Oktober 1999; dan kesaksian tertulis bersama oleh Vicente dos Santos, Victor dos Reis, dan Luis Cairo, 17 Maret 2000.

† Wawancara UNTAET dengan saksi “FG-1,” 12 November 1999.

‡ Seorang wartawan barat melaporkan pada tahun 2001 bahwa sejumlah anak lain—Renato Gonçalves (12), Victorino Lopes (11), dan Francisco Barreto (10)—telah dibunuh di dalam pembantaian di kantor polisi itu. Lihat Mark Dodd, “Widows who share a legacy of murder,” *Suara Timor Lorosae*, 10 Agustus 2001. Laporan ini tampaknya salah. Beberapa anak dibunuh di Maliana bersama dengan ayah mereka, pada pagi hari 8 September, tetapi mereka tidak dibunuh di kantor Polres.

§ Orang-orang yang dilaporkan dibunuh di kantor Polres mencakup: Lourenço Gomes, tokoh klandestinitas tingkat tinggi; Manuel Barros, tokoh pro-kemerdekaan terkenal; Julio Barros, Camat Maliana; Domingos Pereira, Kepala Desa Ritabou; dan Damião, mantan Kepala Desa Tapo.

Milisi juga menysasar keluarga tokoh-tokoh prokemerdekaan. Menurut sebuah laporan, misalnya, milisi yang membunuh José Barros Soares, berkata kepada saudara perempuannya bahwa mereka membunuhnya karena mereka tidak dapat menemukan ayahnya, seorang tokoh prokemerdekaan yang terkenal. Yang juga dipilih untuk dibunuh adalah anggota-anggota TNI dan Polri yang dianggap menjadi simpatisan prokemerdekaan.⁷

Dalam beberapa kejadian, para penyerang menanyakan korban yang dimaksudkan dengan menyebutkan nama mereka. Dalam kasus yang lain, mereka tampak telah mengetahui dengan tepat tempat korban berada di tempat pengungsian. Seorang saksi mengatakan bahwa para penyerang memiliki daftar nama yang menjadi rujukan mereka saat mereka memasuki kompleks pengungsian.

“Saya sedang memasak dan tiba-tiba milisi datang dengan mobil-mobil, dan orang-orang mulai berlarian ke sana-kemari. Lalu ketika orang-orang mulai tenang para milisi dibagi ke dalam beberapa kelompok dan mereka memasuki tenda-tenda mencari orang-orang yang [namanya] ada di dalam daftar untuk dibunuh.”⁸

Di antara mereka yang dijadikan sasaran dengan cara seperti ini adalah tokoh prokemerdekaan yang terkenal dari Maliana, Manuel Barros, yang mengungsi di kantor Polres bersama dengan keluarganya pada 2 September. Sedikitnya empat orang menyaksikan pembunuhan terhadap dirinya, termasuk seorang laki-laki yang berada hanya beberapa meter jauhnya ketika pembunuhan itu terjadi.

Menurut kesaksian dari laki-laki tersebut, segera setelah serangan terhadap kompleks pengungsi dimulai, tiga orang milisi berjalan langsung menuju Manuel Barros dan mulai berbicara kepadanya dengan sikap agresif. Pertama mereka memerintahkannya untuk berdiri, kemudian duduk, dan lalu merentangkan tangannya. Ketika ia merentangkan tangannya, satu dari tiga orang milisi menerjang ke depan dan menikam dirinya di dada dengan pisau. Manuel Barros segera jatuh ke tanah dan meninggal seketika. Tubuhnya kemudian diseret keluar oleh tiga orang milisi.⁹

Banyak saksi yang mengatakan bahwa mereka melihat Kapolres, Mayor Budi Susilo, di dalam kompleks ketika pembunuhan terjadi, dan beberapa saksi mengungkapkan bahwa mereka melihat Kepala Seksi Intelijen Kodim, Letnan Sutrisno, mengendarai sepeda motor dekat Koramil pada malam tanggal 8 September. Setidaknya satu orang saksi mengatakan melihat Letnan Kolonel Siagian maupun Letnan Sutrisno di sekitar kantor Polres: “Ketika saya berjalan keluar kompleks,” saksi ini mengatakan

.....
^{*} Mereka meliputi Domingos P.Gonçalves, seorang prajurit TNI dan Filomeno Guterres, seorang polisi, yang dibunuh di atau dekat kantor polisi pada tanggal 10 September 1999. Wawancara UNTAET dengan saksi “FG-1,” 12 November 1999.

[†] Wawancara dengan Teresinha de Jesus Calao oleh Jill Jolliffe, 16 November 1999.

[‡] Kesaksian Victor dos Reis, dalam kesaksian tertulis bersama, 17 Maret 2000. Lihat juga wawancara dengan Duarte Barros, oleh Jill Jolliffe, 11 November 1999.

kepada seorang wartawan, “saya melihat Komandan Kodim [Siagian] di sana, dengan Kepala Seksi Intel, Letnan Sutrisno. Mereka menunggu sesuatu di dekat mobil Kijang.”

Serangan berlanjut sampai sekitar pukul 21.00, dan pelenyapan mayat dengan segera dimulai. Seperti dalam kasus-kasus pembunuhan massal lainnya pada 1999, proses pelenyapan dilakukan secara metodis dan di bawah pengarahannya perwira-perwira TNI, yang merupakan petunjuk bahwa proses itu telah direncanakan sebelumnya oleh pihak berwenang. Hal ini jelas dilakukan untuk menyembunyikan bukti telah terjadinya suatu kejahatan.

Listrik di wilayah itu diputus dan mayat-mayat diangkut ke atas dua truk atau lebih di dalam selubung kegelapan. Menurut seorang laki-laki yang diperintahkan membantu mengangkut mayat-mayat itu ke atas truk, seorang perwira TNI melacak identitas dan jumlah orang yang meninggal.[†] Truk-truk kemudian dikendarai keluar kota ke Batugade, satu basis kelompok pro-otonomi dekat perbatasan dengan Indonesia. TNI telah membuat persiapan dengan pemimpin milisi setempat, Ruben Tavares (keponakanan João Tavares) dan Ruben Gonçalves, untuk menerima mayat-mayat tersebut dan melenyapkannya. Menurut para jaksa penuntut, anggota milisi mengisi karung-karung beras besar dengan pasir dan mengikatkannya pada mayat-mayat tersebut. Dengan dibebani karung-karung pasir, mayat-mayat kemudian dibawa ke tengah laut dengan perahu-perahu nelayan dan dilemparkan keluar.

Sifat sistematis dan terencana dari kejahatan di kantor Polres Maliana juga diperjelas dengan pembunuhan-pembunuhan selanjutnya yang cirinya sama, seperti yang terjadi dua hari sesudahnya. Setidaknya 13 orang yang berusaha menyelamatkan diri dari serangan di kantor Polres tersebut diburu, ditangkap, dan dibunuh dengan pisau dan parang pada 9 September di Danau Mulau di luar kota Maliana. Sehari kemudian, pada 10 September, dua orang Timor-Leste anggota Polri dibunuh dengan cara yang sama, karena dicurigai berpihak pada kelompok prokemerdekaan.[‡]

Seperti para korban di kantor Polres Maliana, orang-orang yang dibunuh pada 9 dan 10 September adalah para pemimpin terkemuka prokemerdekaan dan orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan.[§] Dan seperti mereka, mayat orang-orang yang dibunuh pada 9 dan 10 September dilenyapkan dalam usaha

.....
* Wawancara dengan Duarte Barros, oleh Jill Jolliffe, 11 November 1999. Saksi lain mengatakan bahwa dirinya melihat mantan Dandim, Letnan Kolonel Siagian, dan Perwira Seksi Intelijen Kodim, Letnan Sutrisno, berada di dalam kompleks Polres pada saat pembunuhan. Wawancara dengan Teresinha de Jesus Calao, oleh Jill Jolliffe, 16 November 1999.

† Wawancara dengan saksi “FB-1” oleh UNAMET, 29 Oktober 1999.

‡ Dua orang polisi yang dibunuh adalah Filomeno Guterres dan Martino Lopes Amaral. Mayat mereka ditemukan di dalam satu sumur yang dalam di dalam kantor Polres Maliana, dan diangkat oleh INTER-FET pada 11 November 1999.

§ Mereka yang dibunuh di Mulau pada 9 September mencakup: Carlos Maia, Lamberto Benevides, Manuel Magalhães de Oliveira, Paulo da Silva, Lucas da Costa, Agostino Marques, Albino Marques, Domingos Titi Mau, dan Vicente Lobato.

menyembunyikan kejahatan. Sisa-sisa tubuh dari dua orang yang dibunuh di Mulau kemudian ditemukan di pantai Batugade, sekitar 50 kilometer dari tempat kejadian pembunuhan mereka.*

Karena usaha yang terencana dengan baik untuk menghilangkan mayat korban, jumlah orang yang dibunuh di kantor Polres Maliana pada 8 September, dan selama dua hari sesudahnya, sangat sulit ditentukan. Menurut para jaksa penuntut, setidaknya 14 orang dibunuh di kantor Polres pada 8 September. Bersama dengan 13 orang yang dibunuh di Mulau pada 9 September, dan dua lainnya yang dibunuh pada 10 September, jumlah orang yang meninggal dalam dua hari tersebut sekitar 29 orang. Untuk Kabupaten Bobonaro secara keseluruhan, jumlah orang yang dibunuh dalam September 1999 sekitar 111 orang, dan beberapa perkiraan menyebutkan jumlahnya mencapai 200 orang. Namun, dengan kuatnya kemungkinan bahwa sebanyak 40 mayat dilemparkan ke laut, jumlah pasti mereka yang meninggal, atau tempat peristirahatan terakhir mereka, tampaknya tidak akan pernah diketahui.

Pembantaian di kantor Polres Maliana ini penting bukan saja karena jumlah orang yang meninggal di sana, tetapi karena pembantaian itu dengan jelas memperlihatkan hubungan operasional yang erat antara milisi, TNI, dan Polri. Karenanya, hal itu juga menunjukkan dengan jelas pertanggungjawaban pihak yang berwenang atas pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia yang termasuk kategori kejahatan terhadap umat manusia.

Pembantaian di Passabe dan Maquelab (September-Oktober 1999)

Dibandingkan dengan beberapa kabupaten yang lain, Kabupaten Oecussi bukanlah pusat utama kegiatan militer atau milisi di sebagian besar tahun 1999. Keadaan berubah secara dramatis di masa sesudah pemungutan suara, khususnya setelah kepergian personel UNAMET dan pengamat internasional lainnya di awal September 1999. Selama beberapa minggu kemudian lebih daripada 150 penduduk sipil dibunuh, beberapa dengan cara yang sangat mengerikan, dan menghasilkan jumlah yang meninggal di Kabupaten Oecussi pada 1999 setidaknya 170 orang.†

Kekerasan terburuk di Kabupaten Oecussi, dan mungkin di seluruh Timor-Leste, terjadi di Desa Passabe dan Maquelab. Di sana, sekitar 100 orang dengan sengaja dibunuh dalam apa yang dikenal sebagai pembantaian Passabe dan Maquelab. Delapan puluh dua korban adalah penduduk dari empat desa di Kecamatan Oesilo, yang terletak di bagian tenggara Oecussi; mereka dibunuh secara bersama-sama di dekat Passabe pada 8-10 September. Setidaknya 12 orang lagi sengaja dibunuh di

* Dua yang ditemukan di Batugade adalah Carlos Maia dan Lamberto Benevides. Memo dari UNTAET District Human Rights Officer, Bobonaro, kepada Serious Crimes Unit, 3 Oktober 2000.

† Kecuali jika disebutkan lain, uraian ini didasarkan pada laporan UNTAET, DHRO-Oecussi, "Report on Human Rights Violations During 1999: Oecussi District," November 2001; dan UNTAET, General Prosecutor, Indictment of Simão Lopes et al., Dili, September 2001.

Desa Maquelab, di pantai utara pada 20 Oktober, hanya dua hari sebelum pasukan INTERFET tiba di Kabupaten Oecussi. Hampir semua desa yang dijadikan sasaran diketahui sebagai basis kuat prokemerdekaan, dan para korban sebagian besar adalah pemimpin atau pendukung kemerdekaan.

Rangkaian kejadian yang dikenal sebagai pembantaian Passabe dimulai pada awal pagi tanggal 8 September. Sekitar pukul 6 pagi kurang lebih 200 anggota milisi Sakunar, yang disertai prajurit-prajurit Batalion 745 TNI, menyerang Desa Tumin, Quebesilo, Nonquican, dan Nibin, di Kecamatan Oesilo, dekat perbatasan dengan Indonesia. Serangan dilancarkan secara serentak dari tiga arah yang berbeda, yang menunjukkan adanya tindakan koordinasi dan perencanaan.

Serangan memang didahului dengan sejumlah pertemuan antara para pemimpin milisi Sakunar dan perwira TNI. Dalam satu pertemuan tanggal 7 September, yang diadakan di pos TNI di Padimau dan dihadiri sekitar 30 orang, Komandan Sakunar Simão Lopes menyusun rencana untuk menyerang desa-desa. Pertemuan kedua terjadi di pagi hari selanjutnya, 8 September, di rumah Kepala Desa Passabe (dan pemimpin milisi Sakunar), Gabriel Colo. Pada pertemuan tersebut, desa-desa tertentu diidentifikasi sebagai sasaran. Setelah itu para milisi berangkat dengan berjalan kaki disertai dengan setidaknya empat prajurit TNI.

Bukti lebih jauh tentang adanya perencanaan, dan peran TNI dalam koordinasi, terdapat dalam fakta bahwa sebagian penduduk desa-desa yang dijadikan sasaran telah mendapatkan peringatan lebih dahulu dari kerabat-kerabat yang tinggal di kota perbatasan Imbate di wilayah Indonesia tentang akan adanya serangan. Rupanya, milisi dan TNI telah menetapkan sebuah basis operasional di Imbate, yang dimaksudkan berfungsi sebagai satu tempat berkumpul setelah serangan awal tanggal 8 September.

Banyak penduduk yang memperhatikan peringatan dini itu lalu menyelamatkan diri ke gunung-gunung sebelum serangan terjadi. Mereka yang tetap tinggal menjadi sasaran serangan terencana oleh para milisi dan tentara yang bersenjata senjataapi otomatis dan rakitan, serta parang, pisau, dan tombak. Sedikitnya 18 orang dibunuh dalam serangan awal ini dan lima lainnya menderita luka parah.* Sejumlah rumah dijarah dan dibakar.

Setelah pembunuhan, mereka yang selamat dari desa-desa yang dijadikan sasaran dikumpulkan oleh milisi Sakunar dan dipaksa menyeberang perbatasan ke kota Imbate di wilayah Indonesia. Di Imbate mereka diharuskan melalui sebuah proses penyaringan dan pemilihan yang lagi-lagi menunjukkan sebuah tindakan dengan perencanaan sebelumnya, dan dengan maksud yang jelas untuk menysar kelompok tertentu dalam penduduk. Selama dua hari, pada 8 dan 9 September, semua yang dibawa ke Imbate didaftarkan di kantor kecamatan dan dibagi menjadi beberapa kelompok menurut umur, tingkat pendidikan, dan asal desa.

* Untuk nama-nama orang yang diketahui telah dibunuh, lihat UNTAET, General Prosecutor, Indictment of Simão Lopes et al.

Petang tanggal 9 September, satu kelompok yang terdiri atas 80 orang pemuda dengan pendidikan di atas rata-rata, dari Desa Quebesilo dan Tumin, dipisahkan dari yang lain. Sekitar pukul 18.00 mereka diikat secara berpasangan, dengan tangan-tangan mereka terikat di balik punggung masing-masing. Dikelilingi oleh sejumlah besar milisi dan perwira TNI Letnan Kolonel Sabraka dan bintangara Sersan Andre Ulan, serta anggota Polri Gabriel Colo, mereka dipaksa berbaris keluar kota Imbate. Dengan TNI, Polri, dan anggota milisi yang mengancam dan memukuli mereka, mereka berjalan di sepanjang perbatasan menuju desa Sungkaen, di mana mereka menyeberangi sungai masuk ke Timor-Leste, dan kemudian turun sepanjang tepian sungai menuju Desa Passabe.

Tidak jauh dari Passabe, di sebuah tempat yang disebut Nifu Panef, para tahanan diperintahkan berhenti dan berbaris di sepanjang tepi sungai. Jarak dari kepala ke ekor barisan sekitar beberapa ratus meter. Di sanalah, sekitar pukul 1 dini hari, pada 10 September, sebuah isyarat diberikan, lalu para milisi dan prajurit TNI mulai membacok para pemuda itu hingga mati dengan parang dan pedang. Beberapa penyerang juga menggunakan senjataapi.

Sekitar pukul 6 pagi, keesokan harinya, masih tanggal 10 September, sekitar 100 lelaki dari Desa Passabe disuruh oleh para milisi untuk mengumpulkan alat-alat yang cocok untuk kerja perbaikan jalan. Mereka kemudian dibawa ke tempat pembunuhan dan diperintahkan menguburkan mayat-mayat di tempat mereka dirobokkan. Para penduduk desa diberitahu bahwa mereka akan dibunuh jika mereka memberikan keterangan tentang apa yang sudah mereka lihat.

Bukti tentang serangan ini kemudian dikumpulkan dari tujuh orang yang berhasil menyelamatkan diri dan lari menuju semak-semak. Sebagian besar dari mereka mengalami luka yang mengancam nyawa akibat parang dan pisau dan beberapa mengalami luka tembak yang parah. Foto-foto yang diambil para penyelidik beberapa bulan setelah kejadian menggambarkan betapa parahnya luka-luka tersebut. Para penyelidik memeriksa tempat pembantaian pada 2000, dan menemukan setidaknya sisa tubuh 47 manusia. Sembilan di antaranya tidak memiliki tengkorak, yang menunjukkan bahwa korban kemungkinan dipenggal oleh para penyerangnya. Para penyelidik juga menemukan bahan pengikat ada bersama sisa-sisa tubuh tersebut, yang membenarkan kesaksian dari orang-orang yang selamat bahwa mereka diikat oleh para penangkap.

Pembunuhan terjadi di tengah malam dan tempat kejadian diterangi hanya dengan sedikit lampu minyak tanah, sehingga orang-orang yang selamat kesulitan mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam pembunuhan. Namun, perancang dan pelaku penting dari pembantaian tersebut yang diketahui meliputi: Danramil Passabe, Letnan Anton Sabraka; Babinsa (bintangara TNI) desa Passabe, Sersan Andre Ulan; anggota Polri dan Kepala Desa Passabe, Gabriel Colo; dan Kepala Desa Cunha, Laurentino Soares (alias Moko).

Pembantaian kedua di periode sesudah pemungutan suara di Oecussi terjadi di wilayah sekitar Maquelas pada 20 Oktober 1999. Sekali lagi, pelaku-pelaku utama

adalah anggota milisi Sakunar, dan para korban adalah orang-orang yang dicurigai maupun yang diketahui sebagai pendukung kemerdekaan. Dua orang pegawai lokal UNAMET juga termasuk di antara mereka yang meninggal.

Sebelum pembantaian ini terjadi, penduduk Maquelas sebagian besar terhindar dari operasi teror. Nasib baik mereka sebagian besar ditentukan oleh usaha-usaha dari mantan kepala desa mereka yang, walaupun sudah digantikan oleh tokoh pro-tonomi, berhasil meyakinkan kelompok milisi lokal untuk tidak menggunakan kekerasan. Namun pembantaian tanggal 20 Oktober sudah berada di luar kemampuannya untuk mengendalikan. Para anggota milisi yang terlibat bukanlah orang-orang setempat, tetapi bagian dari satu kelompok besar yang bergerak ke mana-mana dan terlibat dalam operasi pembersihan yang sistematis. Pada hari mereka mencapai Maquelas, kelompok milisi telah membunuh dua orang di Desa Bokos dan satu lagi di Sai Laut.

Kesulitan di Maquelas dimulai menjelang siang hari 20 Oktober, ketika milisi bersenjata dengan mengendarai delapan truk tiba di wilayah tersebut dan mulai mencari orang-orang yang telah lari ke gunung-gunung. Setelah menemukan sebuah kelompok besar, milisi menyatakan bahwa mereka datang untuk membawa mereka kembali ke desa supaya mereka kemudian bisa pergi dengan aman ke Timor Barat. Para anggota milisi lalu mengumpulkan sekitar 300 orang dan menggiring mereka kembali ke desa dalam barisan. Dalam perjalanan beberapa dari lelaki yang diringkus dipukuli. Sekitar pukul 14.00 dua pemimpin CNRT ditarik keluar dari kelompok dan dibawa ke belakang pasar Maquelas lalu dibunuh di sana.

Sekitar 30 menit kemudian, Wakil Komandan Sakunar, Laurentino Soares (alias Moko), tiba di tempat kejadian dan memerintahkan kelompok penduduk desa itu untuk duduk. Ia kemudian memilih empat orang laki-laki dan memerintahkan mereka berdiri. Saat penduduk yang lainnya melihat dengan ketakutan, Laurentino Soares mengangkat senjatanya dan menembak keempat laki-laki tersebut. Para korban adalah: kepala keamanan CNRT dan staf lokal UNAMET, Francisco Taek; anggota staf lokal UNAMET yang lain, Paulos Kelo; seorang mahasiswa prokemerdekaan, Mateus Ton; dan seorang pemimpin CNRT, Augustinho Sufa.

Segera setelah eksekusi ini, dan tampaknya berdasarkan komando, milisi Sakunar mulai membakar semua rumah dan bangunan di Maquelas, tanpa kecuali. Sepanjang siang dan sore hari mereka juga membunuh enam orang lain, dan mungkin tujuh orang, penduduk desa, sebelum pergi ke Timor Barat. Pasukan INTERFET tiba di Kabupaten Oecussi dua hari kemudian.

Pemeriksaan dan pembunuhan Ana Lemos (13 September 1999)

Korban pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1999 mencakup perempuan dewasa dan remaja. Seperti laki-laki, mereka dijadikan sasaran karena keanggotaan mereka di dalam organisasi-organisasi prokemerdekaan. Mereka juga dijadikan sasaran karena kegiatan politik dari suami atau saudara laki-laki mereka. Ini adalah praktik

yang sudah lama dilakukan pasukan keamanan Indonesia sebelum kejadian pada 1999. Kaum perempuan dewasa dan remaja dijadikan sasaran kekerasan yang sama jenisnya dengan yang dialami kaum laki-laki, yang mencakup pemukulan, penyiksaan, pembunuhan, dan pemindahan paksa. Namun selain itu, mereka mengalami kejahatan yang berkaitan dengan seksualitas, seperti serangan seksual dan perkosaan, dalam jumlah yang tidak proporsional.

Nasib banyak kaum perempuan Timor-Leste pada 1999 digambarkan melalui pengalaman Ana Xavier da Conceição Lemos, seorang aktivis prokemerdekaan dan ibu tiga anak dari Kabupaten Ermera. Ia dipukuli, diperkosa, dan dibunuh oleh para anggota milisi dan prajurit TNI di awal September 1999.*

Ana Lemos adalah seorang anggota ternama dari OMT, satu organisasi perempuan prokemerdekaan yang terkemuka. Begitu ada kesempatan pada 1999, ia berkampanye secara aktif untuk kemerdekaan, secara terbuka mengkritik kekuasaan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan politik. Dua saudara lakinya juga terlibat dalam organisasi prokemerdekaan, satu orang di CNRT dan yang lainnya sebagai anggota Falintil.

Sebagai akibat dari kegiatan dan hubungan dengan kelompok prokemerdekaan ini, Ana Lemos menjadi sasaran ancaman yang berulang-ulang dan kekerasan fisik dari milisi pro-Indonesia. Misalnya, pada April 1999, rumahnya dikepung dan jendelanya dipecahkan oleh para anggota milisi Darah Integrasi, yang juga mencuri uang sejumlah Rp400.000,00 dari rumahnya. Ancaman agak mereda dengan kehadiran pejabat UNAMET di Kabupaten Ermera pada Juni, tetapi milisi tidak pernah berhenti bergerak sepenuhnya. Kenyataannya, selama masa itu, Ana Lemos melaporkan kepada para pejabat UNAMET bahwa ia takut akan keselamatan nyawanya. Ketakutannya terbukti benar.

Di hari pemungutan suara, Ana Lemos bekerja sebagai pengawas antrean di tempat pemungutan suara di Poetete, di Kecamatan Ermera. Pada saat penutupan pemungutan suara, milisi setempat mengancam menyerang, sehingga sebagian besar orang CNRT memutuskan pergi ke tempat kantonisasi Falintil di gunung-gunung yang berdekatan. Sebaliknya Ana Lemos justru kembali ke Gleno ke tempat anak-anaknya. Dengan bantuan seorang anggota Brigade Mobil Polri yang bersimpati, ia menuju ke sana bersama dengan dua orang mahasiswa, kembali ke rumahnya di Gleno sekitar pukul 20.00 tanggal 30 Agustus.

Beberapa saat sekitar tengah malam seorang anggota TNI yang ia kenal, Sersan Melky, datang ke rumahnya bersama dengan beberapa orang laki-laki lain yang diduga anggota milisi. Dua tembakan dilepaskan sehingga jendela dan lampu-lampu di rumahnya hancur. Ana dan kedua mahasiswa awalnya bersembunyi di

* Kecuali jika disebutkan lain, uraian ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini: UNTAET, DHRO-Ermera, "Report on Human Rights Violations During 1999: Ermera District" [Maret 2000]; dan Helene van Klinken, "Taking the Risk, Paying the Price: East Timorese Vote in Ermera," dalam Tanter, Selden and Shalom (penyunting), *Bitter Flowers, Sweet flowers: East Timor, Indonesia, and the World Community*. Rowman & Littlefield, 2001, halaman 91-107. Helene van Klinken adalah Pejabat Urusan Politik UNAMET yang ditugaskan di Ermera pada 1999.

bawah tempat tidur, tetapi orang-orang itu mengarahkan senapan ke arah mereka, sehingga mereka keluar. Ketiga orang itu diinterogasi dan selama interogasi mereka dipukuli.

Sersan Melky yang memimpin interogasi sangat marah kepada Ana Lemos. Ia mengatakan bahwa ia telah melindungi Ana Lemos ketika milisi menyerang Gleno pada 10 April, tetapi ternyata Ana tetap gigih dengan kegiatan prokemerdikaannya. Ia mengancam bahwa, jika Ana melaporkan pertemuan ini kepada UNAMET, ia akan menangkapnya bersama ketiga anaknya setelah PBB pergi. Ia memukuli Ana beberapa kali, menarik rambutnya dan membantingnya. Sementara itu, para anggota milisi mengobrak-abrik rumah Ana untuk mencari uang dan barang-barang lain, yang kemudian mereka ambil dengan mengklaim bahwa barang-barang itu adalah milik Indonesia. Jalur telepon ke rumahnya juga diputus.

Setelah para penyerang itu pergi, Ana dan kedua mahasiswa bersembunyi di taman sebuah pura Bali yang tidak jauh dari rumahnya. Keesokannya di pagi hari, 31 Agustus, ia menghubungi petugas Brigade Mobil yang telah membantu dirinya di hari sebelumnya, dan petugas itu membawa ketiga orang itu ke rumahnya, dan kemudian ke markas UNAMET di Gleno. Namun di sana pun, keselamatan mereka samasekali tak bisa dijamin. Milisi telah mulai berkumpul dengan sikap mengancam di wilayah sekitar kantor, dan hal ini secara efektif mencegah staf PBB meninggalkan kantor. Di luar, para milisi berkeliling di jalanan, membakar gedung-gedung dan menembak-nembakkan senjata mereka.

Karena keadaan keamanan yang memburuk, para pejabat UNAMET memutuskan memindahkan semua staf, kecuali sekelompok kecil staf, ke Dili. Selama beberapa jam, mereka berunding dengan Polri, TNI, dan pemimpin milisi untuk mengizinkan pemindahan yang aman bagi mereka untuk keluar dari kompleks. Anggota milisi bersikeras bahwa para staf lokal, dan orang Timor-Leste lainnya, tidak diperbolehkan pergi, sementara UNAMET juga bersikukuh bahwa mereka harus diizinkan. Akhirnya, kesepakatan dicapai dan sebuah konvoi mobil diisi penumpang dan siap diberangkatkan. Namun, bahkan pada tahap ini para anggota milisi bersenjata dan pasukan keamanan menginspeksi semua kendaraan untuk mencari tokoh-tokoh prokemerdakaan yang dikenal.

Di dalam salah satu mobil, yang dikendarai oleh Pejabat Urusan Kemanusiaan UNAMET, Patrick Burgess, terdapat Ana Lemos, yang diapit di antara dua orang anggota staf internasional, dan mukanya ditutupi dengan selembar syal. Ketika para milisi memeriksa dari satu mobil ke mobil lainnya, petugas Brigade Mobil yang simpatik itu berdiri di samping mobil tersebut dan berbincang-bincang dengan Patrick Burgess. Dengan melakukan hal itu, ia secara efektif mencegah milisi menemukan Ana Lemos di sana dan memastikan bahwa Ana berhasil dengan aman pergi ke Dili bersama UNAMET.

Konvoi tiba di markas besar UNAMET di Dili pada malam harinya. Ana Lemos tinggal di Dili selama beberapa hari, lalu pindah ke tempat baru setiap beberapa hari. Akhirnya setelah terjadinya sebuah serangan terhadap Sekolah Don Bosco

tempat ia tinggal sementara, ia pergi ke kantor Kepolisian Daerah (Polda). Setibanya di sana, ia dilaporkan bertemu dengan bekas suaminya, ayah dari ketiga anak-anaknya. Keduanya dilaporkan berdebat tentang anak-anak mereka, yang tetap berada di Gleno. Sesaat sesudahnya, Ana Lemos pergi berjalan kaki ke Gleno.

Ana baru sampai di luar kota Gleno saat ia dilaporkan diambil oleh seorang perwira TNI, dibawa ke Kodim, dan diinterogasi. Dari Kodim, ia dilaporkan dipindahkan ke kantor milisi Darah Merah di Gleno. Tidak diketahui berapa lama ia ditahan di sana, dan tidak juga pasti apa yang terjadi pada saat itu, tetapi ketika ia kembali ke rumah ibunya pada 11 September tubuhnya penuh dengan memar. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa ia telah dipukuli. Ia mengatakan kepada seorang teman dekatnya, Aliança Gonçalves, bahwa ketika ditahan di Kodim pada hari sebelumnya ia diperkosa oleh Sersan Melky. Menurut Aliança, Ana Lemos mengatakan bahwa Sersan Melky mengancam dirinya dengan sebuah pistol dan mengatakan bahwa ia akan membunuhnya kalau tidak mau bekerjasama.

Pada malam tanggal 11 September, sebuah pesta besar diadakan di sebuah Sekolah Dasar di Gleno, di mana seekor sapi disembelih untuk dimakan. Menurut satu orang kakak laki-laki Ana Lemos, anggota CNRT Flaviano Lemos, seorang anggota milisi di pesta tersebut berkata kepada yang lainnya: “Mari kita membunuh perempuan yang suka bermain politik.” Pada malam yang sama, Ana Lemos memberi ibunya sejumlah uang dan beras, dan mengatakan kepada ibunya bahwa mereka akan membunuh dirinya.

Sekitar pukul 9 pagi tanggal 13 September, Ana Lemos diambil dari rumahnya oleh anggota milisi yang tak dikenal. Ibunya meminta untuk turut bersama tetapi tidak diizinkan. Itulah saat terakhir Ana Lemos terlihat masih hidup. Dua hari kemudian, pada 15 September ibunya beserta ketiga anaknya dibawa ke Atambua. Seorang anggota milisi mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya tidak perlu susah-susah menunggu Ana karena Ana tidak akan pernah kembali.

Pada 5 November, pakaian yang dikenakan Ana Lemos saat terakhir kali terlihat, ditemukan di sekitar 4 kilometer di jalan menuju Aileu. Tidak jauh dari pakaian itu, ditemukan mayat seorang perempuan. Atas permintaan anggota keluarga Ana, pada Maret 2000 mayat itu diangkat. Pemeriksaan forensik menetapkan bahwa sangat mungkin tubuh perempuan itu adalah Ana Lemos.

Tersangka utama penculikan dan pembunuhan terhadap Ana Lemos adalah: Zeca Pereira, pemimpin milisi Darah Merah di Gleno; Lucas, pemimpin milisi Naga Merah di Hatolia; dan Hilario, seorang prajurit TNI. Sesuai dengan penjelasan di atas, Sersan TNI Melky secara langsung bertanggung jawab atas serangan terhadap Ana Lemos pada 31 Agustus, dan ia dicurigai kuat terlibat dalam penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap Ana Lemos.

Kini Ana Lemos dianggap sebagai pahlawan di Distrik Ermera. Sekolah Dasar di kota Gleno didedikasikan untuk mengenang dirinya, dan sisa tubuhnya dikuburkan di bawah monumen yang dibangun di kota yang sama untuk memperingati kemerdekaan Timor-Leste pada Mei 2002.

Amukan Batalion 745 (20-21 September 1999)

Hanya sedikit orang asing yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia pada 1999. Satu perkecualian tragis adalah wartawan Belanda Sander Robert Thoenes yang dibunuh prajurit-prajurit TNI pada 21 September di Dili. Pembunuhan Thoenes hanyalah satu tindakan akhir dalam satu operasi terencana pembunuhan dan penghancuran yang dilaksanakan oleh unsur-unsur Batalion 745 TNI saat batalion itu mundur dari markasnya di Desa Fuiloro, Kabupaten Lautém di bulan September. Ketika tindakan amuk ini akhirnya usai, para anggota batalion telah membunuh setidaknya 21 orang, dan membakar atau menghancurkan puluhan rumah.

Ada indikasi kuat bahwa kekerasan direncanakan dan diarahkan oleh para perwira TNI. Sesaat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara, seorang Komandan Peleton pada Batalion 745, Letnan Camilo dos Santos, dilaporkan mengatakan kepada anakbuahnya bahwa jika pemungutan suara hasilnya adalah kemenangan kemerdekaan, tugas mereka adalah menghancurkan rumah-rumah, membunuh ternak, dan membunuh para pendukung CNRT. Perintah-perintah itu agaknya berasal dari Komandan Batalion 745, Mayor Jacob Sarosa. Menurut tuntutan pidana yang diajukan terhadap Mayor Sarosa oleh Kejaksaan Agung Timor Leste:

“Pada pukul 7 pagi tanggal 30 Agustus 1999, hari Konsultasi Rakyat, Mayor Jacob Djoko Sarosa memerintahkan para prajurit Timor-Leste untuk berbaris. Ia memberi pengarahan kepada para prajurit. Sambil menunjukkan kepada mereka selemba bendera Indonesia dan selemba bendera CNRT ia kemudian mengatakan bahwa siapapun yang memilih CNRT akan dibunuh.”

Rupanya perintah-perintah tersebut masih berlaku, dan pada 17 September, Batalion 745 bergerak dari markasnya di Fuiloro ke Desa Lautém di pantai utara. Dari sana, sebagian besar batalion diangkut dengan kapal pengangkut pasukan menuju Indonesia, tetapi sekitar 120 anggota beserta keluarganya, dan 20 prajurit dari Kodim setempat, tetap tinggal untuk melaksanakan tugas konvoi. Konvoi itu terdiri atas sekitar 40 sepeda motor dan lebih daripada 60 kendaraan berbagai jenis, termasuk setidaknya satu truk TNI yang dilengkapi dengan senapan 12,7 mm. Semua prajurit di dalam konvoi dipersenjatai dengan senjata otomatis dan banyak yang memakai ikat kepala berwarna merah putih. Mereka dipimpin oleh Komandan Batalion 745, Mayor Sarosa.

Pada tahap itu unit-unit TNI, mencakup Batalion 745, telah melakukan serangkaian pelanggaran berat hak asasi manusia di Lautém. Ini mencakup pembunuhan terhadap sekitar 10 orang antara 8 dan 13 September (Lihat ringkasan kabupaten: Lautém).[†]

* General Prosecutor of the Democratic Republic of Timor Leste, Indictment of Maj. Jacob Djoko Sarosa and Lt. Camilo dos Santos, Dili, 6 November 2002, paragraf 10.

† Indictment of Maj. Jacob Djoko Sarosa et al., paragraf 12-40.

Namun, tindakan kekerasan TNI yang terencana ini benar-benar membesar pada 20 September dengan pembunuhan terhadap tiga orang laki-laki di dekat sebuah gudang beras di kota Lautém. Sisa-sisa tiga tubuh manusia yang hangus ditemukan di sebuah perkuburan dekat gudang itu dua tahun kemudian. Beberapa saksi mengisahkan bahwa ketiga orang tersebut—Amílcar Barros, João Gomes, dan Augusto Venancio Soares—ditahan, dipukuli, ditembak, dan kemudian dibakar oleh para prajurit TNI, yang meliputi para anggota Batalion 745.[†] Mereka juga mengatakan bahwa Komandan Batalion 745, Mayor Sarosa, dan Komandan Peleton, Letnan dos Santos, hadir dalam serangan tetapi tidak bertindak mencegah atau menghentikannya.[‡]

Kemudian pada hari yang sama, 20 September, konvoi Batalion 745 mulai bergerak dari Lautém ke Desa Laga di Kabupaten Baucau. Setelah berkemah semalam di Laga, para anggota batalion menghancurkan dan membakar tempat tinggal mereka dan sejumlah rumah di desa itu sebelum pergi.

Ketika bergerak ke barat, pada 21 September, para anggota Batalion 745 dilaporkan membunuh dua orang pemuda yang mereka dapatkan sedang mengendarai sebuah sepeda motor di sepanjang jalan utama dari Baucau. Para saksi mata mengatakan bahwa kedua pemuda itu—Egas da Silva dan Abreu da Costa—dihentikan di dekat Desa Buile, Kecamatan Laga, dan kemudian ditembak oleh para serdadu ketika mereka berusaha melarikan diri. Menurut surat dakwaan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung Timor Leste, Abreu da Costa ditembak di kaki kanan dan mata kanannya, dan Egas da Silva ditembak di perut, leher, dan dada.[§] Seorang kerabat dari kedua laki-laki itu belakangan mengatakan kepada seorang wartawan, “Saya selalu bermimpi tentang mereka.”[¶]

Kemudian pada hari yang sama, para anggota Batalion 745 membunuh setidaknya empat orang lagi, termasuk dua orang perempuan ketika para serdadu itu melewati Desa Buruma dan Caibada, di dekat kota Baucau. Keempat korban—Victor Belo, Carlos da Costa Ribeiro, Elisita da Silva, dan Lucinda da Silva—dibunuh ketika para prajurit melancarkan serangan ke desa-desa, dan menembak membabitua ke arah penduduk sipil ketika mereka berlarian menyelamatkan diri. Menurut para anggota keluarga dan teman-teman, Victor Belo ditembak oleh dua prajurit di belakang konvoi setelah kembali untuk mengunci pintu rumahnya; Carlos da Costa Ribeiro ditembak di kepala di dalam rumahnya; Lucinda da Silva ditembak di dada ketika melarikan diri dari tentara; dan Elisita da Silva meninggal setelah ditembak di kedua kakinya.[¶]

* Para prajurit dari Batalion 621 juga disebut ambil bagian dalam pembunuhan ini.

† UNTAET, SCU, “Synopsis in Respect to TNI 745 Battalion and the Murder of Sander Thoenes,” 9 September 2001.

‡ Indictment of Maj. Sarosa et al., paragraf 65.

§ Dikutip dalam Cameron W. Barr, “A Brutal Exit: Battalion 745,” Bagian 1 dari 4, *Christian Science Monitor*, 13 Maret 2000.

¶ Cameron W. Barr, “A Brutal Exit: Battalion 745,” Bagian 3 dari 4, *Christian Science Monitor*, 13 Maret 2000.

Ayah Elisita da Silva menceritakan tentang serangan itu sebagai berikut:

“Ketika saya melihat konvoi TNI mereka sudah menembakkan senjata-senjata mereka ke arah semak-semak. Ada tembakan senapan satu-satu dan otomatis dan mereka juga menembakkan peluncur granat ke hutan. Saya juga melihat para prajurit TNI berjalan kaki menyusir dari rumah ke rumah dan tanah semak untuk mencari orang-orang. Sehingga kami (Jacinta, Elisita, Cezarina, dan Zelia) bersembunyi di balik sebuah batu besar, yang ada di sebelah rumah kami. Beberapa saat kemudian dua orang prajurit TNI menahan saya... Setelah para prajurit membebaskan saya, saya langsung pergi ke belakang rumah saya dan saya melihat anak perempuan saya Elisita telah ditembak di kedua kakinya. Kedua kakinya patah dan banyak darah mengalir. Dia masih hidup dan mengatakan kepada saya bahwa dia sangat kesakitan.”

Para prajurit Batalion 745 melakukan beberapa pembunuhan lagi di dekat Desa Laleia, Kabupaten Manatuto, sebelah barat Baucau. Mereka yang meninggal adalah tiga orang laki-laki, yang tidak bersenjata, yang dibunuh ketika berlangsung serangan ke sisi timur jembatan Laleia, dan seorang laki-laki yang diduga pejuang Falintil, yang ditikam dan ditembak oleh para serdadu yang kemudian memotong salah satu telinganya. Tiga orang lainnya, termasuk seorang perempuan, dilaporkan ditahan di dekat Laleia, dipukuli, dan kemudian diserahkan kepada tentara di Kodim Manatuto. Mereka tidak kelihatan lagi dan diduga sudah dibunuh.[†] Beberapa dari korban dieksekusi ketika berada dalam tahanan, dan dilaporkan eksekusi itu dilaksanakan atas perintah dari perwira-perwira TNI.[‡]

Kekerasan lain, meliputi setidaknya tiga pembunuhan lagi, berlangsung ketika konvoi Batalion 745 bergerak memasuki Dili menjelang petang hari 21 September. Melintasi sepanjang Jalan Becora sekitar pukul 16.30, seorang jurnalis Inggris, Jon Swain, dan seorang fotografer Amerika, Chip Hires, berpapasan dengan konvoi ini. Kedua wartawan ini, yang disertai seorang penerjemah, Anacleto da Silva, menaiki sebuah taksi biru tua, yang dikemudikan seorang penduduk setempat, Sancho Ramos da Resuriação.[§]

Menurut sejumlah saksi, para prajurit dari konvoi berhenti dan mengepung taksi, dan mulai melancarkan gangguan serta menarik-narik pintu mobil. Seorang serdadu menghantam kepala si pengemudi dengan popor senapannya, “menyebabkan bola mata kanannya keluar dari kelopak mata.”[¶] Si penerjemah, Anacleto da Silva, dilaporkan ditarik dari taksi dan dibawa ke dalam kendaraan TNI. Seorang saksi

* Direkam dalam UNTAET, SCU, “Synopsis in Respect of TNI 745 Battalion,” 9 September 2001.

† UNTAET, SCU, “Synopsis in Respect to TNI 745 Battalion,” 9 September 2001.

‡ Ibid.

§ Sumber-sumber yang berbeda menyebutkan nama pengemudi sebagai ‘Sanjo Ramos’ dan ‘Sanchos Ramos Daressuricao.’

¶ Indictment of Maj. Sarosa et al., paragraf 88.

mengatakan kepada para penyelidik PBB bahwa dirinya melihat seseorang yang sesuai dengan gambaran sosok Anacleto dipukuli para prajurit Batalion 745 di Korem Dili pada malam hari itu. Anacleto tidak pernah terlihat lagi dan diyakini telah dibunuh.[¶]

Sejumlah tentara menggeledah taksi dan menyita semua milik wartawan tersebut, termasuk kamera-kamera, rol-rol film, dan sebuah tas. Seorang prajurit kemudian menembak ban mobil dan radiator taksi untuk mencegah para wartawan melanjutkan perjalanannya. Pengemudi taksi di kemudian hari bersaksi di hadapan para penyelidik PBB bahwa Letnan Camilo dos Santos dari Batalion 745 ambil bagian dalam penyerangan itu.[†]

Juga hadir di tempat kejadian adalah Komandan Batalion, Mayor Jacob Sarosa. Selama kejadian, ia dilaporkan mengatakan kepada para wartawan bahwa prajuritnya, “sangat marah, sangat marah terhadap PBB dan anda sekalian orang-orang Barat. Anda harus mengerti.”[‡] Dalam satu wawancara dengan penyelidik PBB pada November 1999, Mayor Sarosa membantah mengetahui adanya, atau terlibat dalam, pemukulan terhadap pengemudi atau penculikan terhadap si penerjemah.[§] Tetapi ia mengakui bahwa taksi itu dihentikan dan digeledah, barang-barang milik para wartawan disita dan dihancurkan, dan ban mobil taksi ditembak, berdasarkan perintahnya.

Masih di sore hari 21 September, sekitar 400 meter lagi melalui Jalan Becora, para prajurit Batalion 745 kembali membunuh satu orang lagi, Manuel Andreas. Pembunuhan itu disaksikan oleh dua orang, dan salah satunya yang memberikan kesaksian berikut ini kepada para penyelidik:

“Sore hari itu, saya kira sekitar pukul 5 sore, saya sendiri, Manuel [yang kemudian dibunuh], dan António... mulai berjalan di sepanjang jalan utama menuju jembatan dan sungai. Saya kira António berada di depan, kemudian saya, dan Manuel di belakang kami. Ketika kami berjalan, saya mendengar ledakan tembakan senapan dan melihat langsung ke depan bahwa António telah ditembak di lengan kanannya. Pada saat yang sama saya melihat Manuel jatuh ke tanah dan mulai berteriak. Saya lalu melihat bahwa dia telah ditembak di dada. Tembakan berlanjut sehingga saya dan António berlari mencari perlindungan di perbukitan.”[¶]

Tindakan terakhir dalam kekerasan dua hari Batalion 745 terjadi segera sesudahnya, sekitar 300 meter lebih lanjut di Jalan Becora. Di sana para prajurit membunuh dan memotong bagian tubuh wartawan Belanda Sander Robert Thoenes.

.....
^{*} UNTAET, DHRO-Dili, “Key Cases of HRVs/Abuses in Dili District,” 15 September 2002.

[†] UNTAET, SCU, “Synopsis in Respect to TNI 745 Battalion,” 9 September 2001.

[‡] UNTAET, DHRO-Dili, “Key Cases,” 15 September 2002.

[§] Ibid.

[¶] UNTAET, SCU, “Synopsis in Respect to TNI 745 Battalion,” 9 September 2001.

Sander Thoenes baru tiba di Dili untuk meliput kehadiran INTERFET untuk surat kabar *Financial Times*. Menurut para saksi ia pergi dari Hotel Turismo sekitar pukul 17.00 tanggal 21 September, dengan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh pengemudi setempat, Florindo da Conceição Araújo. Ketika mereka menyusuri Jalan Becora, mereka berpapasan dengan beberapa prajurit TNI mengendarai sepeda motor, membawa senjata otomatis. Para prajurit meneriaki kedua orang itu agar berhenti. Namun karena ketakutan akan keselamatan diri dan penumpangnya, si pengemudi berusaha berputar berbalik arah dan melarikan diri. Para prajurit membuka tembakan, dan sepeda motor terguling yang menyebabkan pengemudi dan penumpangnya jatuh ke tanah. Si pengemudi berhasil melarikan diri, meninggalkan Sander Thoenes tergeletak di jalan.^{*}

Para saksi mengatakan bahwa empat atau lima prajurit lalu menyeret Sander Thoenes keluar dari jalan ke dalam satu tempat tertutup, tempat di mana tubuhnya ditemukan keesokan paginya.[†] Ia ditembak di dadanya, dan penyerangnya memotong telinga kirinya dan menyayat sebagian wajahnya dengan ketepatan ilmu bedah. Sebagian jari Sander Thoenes juga hilang, tetapi diyakini bahwa luka-luka ini terjadi ketika sepeda motor jatuh.

Menurut seorang ahli patologi Australia yang melakukan pemeriksaan pasca kematian (*post-mortem*) terhadap tubuh Thoenes di Darwin pada 24 September 1999, sebab kematiannya adalah satu tembakan tunggal ke dada. Pada 2001, seorang penyelidik Belanda dan seorang polisi militer Australia menulis: “Bisa disimpulkan ... [bahwa] Sander Thoenes dibunuh oleh seorang militer dari Batalion 745 TNI dengan satu tembakan di punggung.”[‡]

Segera sesudah pembunuhan Thoenes, konvoi Batalion 745 bergerak ke markas Korem di pusat kota Dili. Di sana, bersama dengan kesatuan-kesatuan Korem dan Brimob, mereka menerima pengarahan singkat dari Komandan Korem yang baru diangkat, Kolonel Noer Muis. Menurut para saksi, Kolonel Muis memerintahkan para anggota Batalion 745 untuk segera meninggalkan kota segera setelah mereka makan dan mengisi kembali tangki bensin kendaraan. Ia juga memerintahkan mereka untuk tidak mengatakan apapun tentang tindakan mereka selama dua hari sebelumnya. Menurut satu kesaksian, kata-katanya adalah sebagai berikut:

“Kalian tidak perlu mengatakan kepada siapapun tentang apa yang telah kalian lakukan selama perjalanan ke sini. Istri kalianpun jangan diberi tahu. Dari Dili ke Kupang jalanan aman, kalian tidak perlu menembak.”[§]

* INTERFET, Investigation Section, “Alleged Murder of Sander Robert Thoenes – Interim Report,” Dili, 24 November 1999.

† Para saksi itu dikutip dalam Cameron W. Barr, “A Brutal Exit: Battalion 745,” Bagian 4 dari 4, *Christian Science Monitor*, 17 Maret 2000; dan dalam INTERFET, Investigation Section, “Alleged Murder of Sander Robert Thoenes – Interim Report,” Dili, 24 November 1999.

‡ Dikutip dalam INTERFET, Investigation Section, “Alleged Murder of Sander Robert Thoenes –Interim Report,” Dili, 24 November 1999.

§ Indictment of Maj. Sarosa et al., paragraf 104.

Pada malam harinya, konvoi bergerak ke luar Dili, mencapai kota perbatasan Balibó tanpa insiden lebih lanjut. Pada hari selanjutnya, 22 September, konvoi itu melanjutkan perjalanan ke Kupang, tiba sekitar pukul 22.00. Beberapa saat setelah sampai di sana, Mayor Sarosa, Letnan Camilo, dan Letnan James diwawancarai oleh polisi militer TNI. Ketiganya kemudian ditahan selama satu atau dua minggu.⁷

Lepas dari penahanan singkat ini, sampai dengan Maret 2003 tidak ada satu pun dari anggota Batalion 745 yang dihukum sehubungan dengan pembunuhan dan tindak pidana lain yang diuraikan di sini. Para jaksa penyelidik Indonesia mengaku tidak menemukan bukti mengenai keterlibatan TNI dalam suatu pembunuhan, dan semua jaksa Indonesia memilih tidak mengajukan kasus-kasus ini ke pengadilan.

Pembunuhan rohaniwan Los Palos (25 September 1999)

Satu aspek yang paling mengejutkan dari strategi pro-otonomi, baik sebelum dan sesudah pemungutan suara, adalah mengarahkan sasaran pada rohaniwan dan tempat-tempat ibadah Katolik Roma. Pembantaian di Gereja Liquiçá dan Suai masing-masing pada April dan September dan serangan terhadap kediaman Uskup Dili pada September tampaknya sengaja diperhitungkan untuk meneror penduduk yang 80% menganut agama Katolik Roma. Serangan-serangan itu juga dimotivasi oleh satu anggapan bahwa Gereja telah mendukung posisi prokemerdekaan.

Kedua motivasi ini jelas terlihat dalam salah satu peristiwa kekerasan yang paling mengerikan selama periode setelah pemungutan suara: penyergapan dan pembunuhan dengan cara eksekusi terhadap satu kelompok yang terdiri atas lima rohaniwan dan empat orang awam oleh sekelompok milisi di Lautém pada 25 September.⁸ Para korban mencakup seorang biarawati yang dibacok dengan parang ketika ia berlutut, berdoa di tepi jalan, kemudian dilempar ke sungai dan ditembak mati.⁹

Pengadilan terhadap para pelaku, yang semuanya tergabung dalam kelompok milisi Tim Alfa, mengukuhkan bahwa pembunuhan tersebut direncanakan dengan baik dan bermotivasi politik. Para pemimpin operasi mengetahui identitas tokoh-tokoh agama yang mereka bunuh dan menganggap mereka sebagai sasaran yang sah karena bersimpati pada kelompok prokemerdekaan. Penting bahwa pengadilan juga menegaskan bahwa Tim Alfa diorganisasikan oleh, menerima perintah dari, dan memiliki “hubungan dekat dan kontak terus-menerus” dengan Kopassus, dan khususnya dengan komandan di wilayah tersebut, Letnan Syaful Anwar.¹⁰

* INTERFET, Investigation Section, “Alleged Murder of Sander Robert Thoenes – Interim Report,” Dili, 24 November 1999.

† Kecuali jika disebutkan lain, penjelasan berikut didasarkan pada bukti dan kesaksian yang direkam dalam: Dili District Court, Special Panel for Serious Crimes, “Judgement” dalam kasus Joni Marques et al., 11 Desember 2001.

‡ Orang-orang yang meninggal diidentifikasi dalam proses pengadilan sebagai: Suster Emilia Cazzaniga, Suster Celeste de Carvalho, Bruder Jacinto Xavier, Bruder Fernando dos Santos, Bruder Fernando da Conceição, Agus Muliawan, Cristóvão Rudi Barreto, Titi Sandora Lopes, dan Izinho Freitas Amaral. Lihat “Judgement,” Joni Marques et al., Desember 2001.

§ Kesaksian Joni Marques, dalam “Judgement,” halaman 52-57 dan 398.

Pada 25 September, komandan Tim Alfa, Joni Marques, dan sejumlah anggota lain berangkat dari pelabuhan Com, di Kabupaten Lautém, menuju kota Lautém. Tujuan utama perjalanan mereka adalah untuk mendapatkan beras dari gudang dekat Lautém, tetapi ada alasan untuk mempercayai bahwa niat mereka sesungguhnya adalah untuk menyergap dan membunuh para rohaniwan. Indikasi paling jelas bahwa mereka tidak sepenuhnya berniat mengambil beras adalah bahwa mereka meluncur melewati gudang beras. Selain itu, setidaknya tujuh orang dari kelompok tersebut bersenjatakan senapan otomatis SKS, jenis senjata yang digunakan pasukan keamanan Indonesia, dan sebagian besar juga membawa parang dan pisau.

Sekitar satu kilometer setelah melalui Lautém, rombongan milisi ini melewati dua orang pemuda yang sedang mendorong sebuah gerobak di jalan. Komandan milisi Joni Marques memerintahkan sopirnya berhenti, dan para anggota milisi melompat keluar serta mengejar dua orang tersebut, dengan melemparkan batu-batu dan menembakkan senjata mereka ke arah dua orang tersebut. Salah seorang di antaranya, José Pereira, terluka tetapi berhasil mendarat diri.^{*} Orang yang kedua, Izinho Freitas Amaral, tertangkap, diikat pada sebatang pohon di dekat tepi jalan, dan kemudian dibunuh. Dalam temuannya tentang kasus ini pada Desember 2001, Panel Khusus Kejahatan Berat pada Pengadilan Distrik Dili menyimpulkan bahwa milisi telah mengejar dua orang pemuda dan membunuh salah satu dari mereka untuk memastikan tidak ada saksi untuk kejahatan yang akan mereka lakukan.[†]

Joni Marques kemudian memerintahkan anakbuahnya menyiapkan sebuah penghalang jalan dengan menempatkan batu-batu besar di tengah jalan. Beberapa orang milisi ditempatkan di bukit yang berdekatan sebagai pengawas, dan yang lain mengambil posisi di dalam sebatang parit dengan senjata yang diarahkan ke jalan. Seorang saksi mengingat bahwa setelah menyiapkan penghalang jalan, Joni Marques mengatakan: "Sekarang kita akan menunggu para Suster yang akan menuju Baucau... dan ketika mereka datang kita bunuh mereka semua."[‡]

Sekitar pukul 14.30 pada hari yang sama, sebuah kendaraan roda empat berwarna abu-abu mulai terlihat dari arah Lautém dan bergerak ke barat menuju Baucau. Ada delapan orang di dalam mobil, termasuk dua orang biarawati, tiga orang Bruder/Pastor, seorang wartawan, dan dua orang awam. Ketika kendaraan berhenti di dekat penghalang jalan, Joni Marques dan dua milisi lainnya mulai menembaki mobil tersebut dengan senjata otomatisnya, yang langsung membunuh pengemudi dan sebagian penumpangnya.

Ketika salah seorang dari para penumpang yang selamat berusaha keluar dari kendaraan, seorang anggota milisi menangkapnya dan menyeretnya ke sungai

^{*} Untuk penjelasan José Pereira tentang peristiwa ini, lihat "Judgement," Joni Marques et al., halaman 264-265.

[†] "Judgement," Joni Marques et al., halaman 403-403.

[‡] "Judgement," Joni Marques et al., Kesaksian Manuel da Costa, halaman 279.

tempat ia ditembak mati. Milisi yang sama menyiramkan minyak ke tubuh tiga orang lain yang selamat dan membakar mereka. Salah satu dari ketiga orang itu lari dari mobil ke sungai, tetapi di sana Joni Marques dan seorang laki-laki lain menembaknya sampai mati.

Salah seorang suster, Suster Erminia, keluar dari kendaraan dan berlutut di pinggir jalan untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, seorang milisi (Horacio) membacoknya dengan parang. Milisi yang lain (Pedro da Costa) bersaksi bahwa ia berteriak, “Jangan bunuh Suster!” Tetapi Joni Marques menjawab, “Bunuh mereka semua! Mereka semua CNRT!” Seorang milisi kemudian mengambil Suster Erminia dan melemparkannya ke dalam sungai sebelum menembaknya dua kali. Di pengadilan, seorang saksi mengungkapkan:

“Saya melihat seorang suster duduk di samping [parit]. Ada satu tubuh di samping suster itu. Saya melihat kerudung suster itu ada di pundaknya. Suster itu berbicara kepada saya dalam bahasa Tetum. Saya tidak dapat mengingat semua kata-katanya, tetapi saya ingat ia berkata, ‘Oh! Tuhan!’”

Pada saat itu, Joni Marques memerintahkan anakbuahnya mendorong kendaraan para rohaniwan itu ke dalam sungai. Beberapa saksi mengatakan bahwa ia berteriak: “Kemari dan dorong mobil ini, kalian bajingan!” Orang-orang itu melakukannya, walaupun masih ada satu orang di dalam mobil. Ketika orang itu keluar dari mobil, ia ditembak mati.

Para penyerang kemudian berbalik ke Izinho Freitas Amaral, orang muda yang awalnya mereka ikat ke sebatang pohon. Seorang milisi memotong telinga Izinho dan membacok lehernya dengan sebilah pedang. Ia kemudian didorong ke dalam sungai, selanjutnya ditembak mati. Akhirnya Joni Marques melemparkan sebuah granat ke dalam sungai, tempat mereka yang mati dan terluka tergeletak, untuk memastikan bahwa tidak akan ada yang selamat.

Untuk kejahatan ini, dan kejahatan lain yang dilakukan pada 1999, Joni Marques dan dua anggota lain milisi Tim Alfa dinyatakan bersalah dan dihukum selama 33 tahun dan 4 bulan penjara. Enam anggota milisi yang lain mendapatkan hukuman berkisar antara 5 sampai 19 tahun. Hingga Maret 2003 tidak ada perwira TNI yang diadili sehubungan dengan kejahatan ini.

.....
* “Judgement,” Joni Marques et al., Kesaksian Gilberto da Costa, halaman 6-271.

Tanggung jawab individual dan komando

Bukti yang ditampilkan di dalam laporan ini secara konklusif menunjukkan bahwa kekerasan pada 1999 adalah bagian dari serangan yang luas dan sistematis terhadap penduduk sipil, dan dalam kekerasan tersebut para pendukung kemerdekaan Timor-Leste dengan sengaja dijadikan sasaran. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dibahas bukan hanya merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, melainkan juga kejahatan terhadap umat manusia.^{*} Masih tetap perlu dikaji dengan baik siapa yang harus bertanggung jawab untuk kejahatan-kejahatan tersebut.

Dalam pengertian tertentu, jawabannya sudah jelas: pihak yang bertanggung jawab adalah milisi, prajurit TNI, dan petugas Polri yang langsung melakukan kejahatan tersebut. Banyak dari mereka telah didakwa, dan sebagian di antaranya telah diadili di Timor Leste dan Indonesia, untuk satu atau beberapa tindakan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilakukan pada 1999. Namun, tanggung jawab untuk kejahatan terhadap umat manusia tidak berhenti pada para pelaku langsung saja. Menurut hukum internasional, maupun hukum dalam negeri di Indonesia dan Timor-Leste, tanggung jawab ini juga meluas pada orang-orang yang memerintahkan atau memfasilitasi kejahatan-kejahatan tersebut, dan orang-orang yang gagal mengambil tindakan yang mencukupi untuk menghentikan kejahatan tersebut atau menghukum para pelakunya.

Atas dasar tersebut, laporan ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab untuk kejahatan terhadap umat manusia di tahun 1999 menjangkau sampai tingkat tertinggi pimpinan militer, kepolisian, dan pemerintah sipil Indonesia. Lebih tepatnya, laporan ini mengidentifikasi sekitar 80 perwira militer dan pejabat sipil, berpangkat letnan kolonel dan bupati atau lebih tinggi, yang agaknya mengemban tanggung jawab hukum atas kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada 1999 (Lihat Tabel 1). Sebagian di antara mereka terlibat aktif melakukan, memerintahkan, atau melancarkan terjadinya kejahatan, dan dengan demikian bisa dikatakan memiliki 'tanggung jawab pidana individual' atas kejahatan-kejahatan tersebut. Lainnya gagal menghentikan kekerasan itu atau menghukum bawahan mereka, dan dengan demikian memiliki 'tanggung jawab komando' atas kejahatan-kejahatan tersebut.

Bukti yang ditampilkan dalam laporan ini, dan dibahas dalam bab ini, juga menjadi pengingat bahwa dalam menangani masalah pertanggungjawaban, harus dilihat apa yang ada di balik tindakan-tindakan individu, harus dikaji akibat dari norma serta praktik kelembagaan dan negara. Karenanya, laporan ini menyampaikan bahwa tanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada 1999 juga ada pada angkatan bersenjata Indonesia sebagai suatu lembaga, dan pada negara Indonesia.

^{*} Walaupun tidak diajukan di dalam laporan ini, banyak dari tindakan yang dipersoalkan juga merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

Tanggung jawab pidana individual

Konsep tanggung jawab pidana individual dijabarkan dalam Pasal 25 Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional,^{*} dan dalam hukum nasional Timor Leste dan Indonesia. Dalam Pasal 14 Regulasi UNTAET No. 15/2000, yang berdasarkan pada Pasal 25 Statuta Roma, seseorang dikatakan memiliki tanggung jawab pidana individual jika yang bersangkutan melakukan, memerintahkan, meminta, membantu, mengajak ,atau menyumbang pelaksanaan, atau usaha pelaksanaan sebuah kejahatan berat. Lebih tepatnya, Pasal 14.3 menyatakan bahwa:

“... seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi panel [kejahatan berat] kalau orang yang bersangkutan:

- (a) melakukan kejahatan tersebut, baik secara sendirian, bersama orang lain atau melalui orang lain, tanpa memandang apakah orang lain itu bertanggung jawab secara pidana;
- (b) memerintahkan, meminta, atau mengajak dilakukannya kejahatan itu yang dalam kenyataan terjadi atau diupayakan terjadi;
- (c) untuk keperluan memperlancar dilakukannya kejahatan tersebut, membantu, bersekongkol, atau mendukung pelaksanaan atau upaya pelaksanaannya, termasuk menyediakan sarana untuk pelaksanaannya;
- (d) dengan satu atau lain cara menyumbang pada pelaksanaan atau upaya pelaksanaan kejahatan tersebut oleh sekelompok orang yang bertindak dengan satu tujuan bersama...”

Klarifikasi lebih jauh dari konsep tanggung jawab pidana individual di dalam hukum internasional ditemukan dalam keputusan Banding Tadic (15 Juli 1999) pada Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia/*International Court Tribunal for Yugoslavia* (ICTY). Keputusan itu membedakan antara keterlibatan dalam satu kejahatan melalui “membantu dan bersekongkol” dengan keterlibatan dalam memajukan “tujuan kriminal bersama”.[†] Kedua bentuk keterlibatan ini menjadi landasan bagi tanggung jawab pidana individual untuk suatu kejahatan terhadap umat manusia. Perbedaan utama antara dua konsep ini terletak pada kekhususan tindakan-tindakan yang diuraikan, di mana “membantu dan bersekongkol” menyiratkan tingkat kekhususan yang lebih besar daripada tindakan memajukan “tujuan kriminal bersama”. Dalam bahasa keputusan ICTY:

^{*} Teks lengkap Statuta Roma dapat dilihat dalam situs jaringan Pengadilan Pidana Internasional: <http://www.un.org/law/icc/>

[†] Keputusan Banding Tadic, 15 Juli 1999: <http://www.un.org/icty/tadic/appeal/judgement/index.htm> paragraf 185-230.

“Orang yang membantu dan bersekongkol melakukan tindakan yang secara khusus diarahkan untuk membantu, mendorong, atau memberikan dukungan moral pada pelaksanaan kejahatan khusus tertentu (pembunuhan, pembasmian, pemerkosaan, penyiksaan, penghancuran yang disengaja terhadap barang sipil, dan sebagainya), dan dukungan ini berpengaruh besar pada pelaksanaan tindak kejahatan yang dimaksudkan. Sebaliknya, dalam kasus bertindak untuk mengejar tujuan atau rancangan bersama, adalah cukup bagi peserta untuk melakukan tindakan-tindakan yang dengan satu atau lain cara diarahkan untuk mencapai rencana atau tujuan bersama.”

Keputusan Banding Tadic juga memperjelas bahwa rencana, rancangan, maupun tujuan pidana bersama tidak harus dirancang atau dirumuskan terlebih dulu. “Rencana atau tujuan bersama bisa terwujud tanpa persiapan dan dapat disimpulkan dari fakta bahwa banyak orang bertindak serempak untuk melakukan suatu upaya pidana bersama.”[†]

Dengan statuta-statuta ini sebagai panduan, dan berdasarkan bukti yang dikemukakan dalam laporan ini, maka bisa diidentifikasi nama puluhan anggota milisi, pejabat-pejabat TNI, Polri, dan pemerintah sipil sebagai pihak yang secara individual bertanggung jawab atas kejahatan terhadap umat manusia. Tentu saja, daftar nama ini mencakup anggota milisi yang secara langsung melakukan tindakan-tindakan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan penganiayaan terhadap para pendukung kemerdekaan dalam 1999. Daftar ini juga mencakup sejumlah anggota TNI dan Polri berpangkat rendah yang secara langsung melakukan atau memerintahkan kejahatan itu. Banyak dari mereka telah didakwa oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste untuk Kejahatan Berat, dan sebagian telah didakwa dan diadili di hadapan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Indonesia.[‡]

Sebagian besar tersangka yang secara formal didakwa dengan pertanggungjawaban pidana individual adalah milisi biasa atau para pemimpin milisi yang ‘menarik pelatuk.’ Namun, sebagian di antara mereka telah didakwa dengan pertanggungjawaban individual atas tindakan membantu, bersekongkol, atau dengan cara lain menyumbang pada pelaksanaan kejahatan itu. Atas dasar itulah maka Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Adam Damiri, Kolonel Tono Suratman, Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, dan Gubernur Abilio Osório Soares didakwa oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste untuk

* Ibid., paragraf 229 (iii).

† Ibid., paragraf 227 (ii).

‡ Sampai dengan akhir Mei 2003, pihak berwenang di Timor Leste telah mengeluarkan 60 surat dakwaan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian pada 1999, yang menuntut 247 individu, sebagian besar dengan dakwaan kejahatan terhadap umat manusia. Lihat UNMISSET, Serious Crimes Unit, “Serious Crimes Update V/03,” Dili, 28 Mei 2003. Sementara itu, pihak berwenang Indonesia telah mengeluarkan dakwaan terhadap seluruhnya 18 individu dengan dakwaan kejahatan terhadap umat manusia. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang kedua proses hukum tersebut ikuti Bab 12.

Kejahatan Berat pada Februari 2003.* Bukti dalam laporan ini mendukung dengan kuat tuduhan-tuduhan dalam dakwaan tersebut.

Namun, selain itu bukti-bukti yang ditampilkan di sini menunjukkan bahwa para perwira dan pejabat lain juga mengemban tanggung jawab pidana individual atas kejahatan yang dilakukan pada 1999. Memang, uraian Regulasi No. 15/2000 dan keputusan ICTY atas Banding Tadic 1999 yang dikutip di atas membenarkan bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk kejahatan terhadap umat manusia di Timor-Leste—di luar pelaku langsung dari kejahatan tersebut—bisa mencakup setiap orang yang melakukan salah satu atau lebih daripada hal-hal berikut ini:

- membantu membentuk milisi dan merekrut para anggotanya;
- membuat pernyataan terbuka mendukung milisi;
- memberikan pengakuan hukum dan politik kepada milisi;
- memberikan pelatihan dan pembinaan militer kepada milisi;
- melakukan koordinasi atau mengadakan operasi tempur bersama dengan kelompok-kelompok milisi;
- memberikan senjata dan/atau amunisi kepada milisi;
- memberikan dukungan finansial dan/atau material kepada milisi.

Dengan berlimpahnya bukti dalam laporan ini mengenai peran pihak berwenang Indonesia dalam melakukan hal-hal tersebut, maka masuk akal jika dikatakan bahwa ada lusinan pejabat militer, kepolisian, dan pemerintah sipil yang mengemban tanggung jawab pidana individual untuk kejahatan terhadap umat manusia di Timor-Leste. Para tersangka utama ini tercantum dalam Tabel 1.

Manajer dan perencana

Sementara banyak pejabat yang mungkin mengemban tanggung jawab hukum individual untuk kejahatan-kejahatan pada 1999, tetapi membedakan berbagai jenis atau derajat kesalahan itu ada gunanya. Ada dua kategori umum di luar ‘penarik pelatuk’ yang dikemukakan di sini: *pertama*, mereka yang mengelola kelompok-kelompok milisi di Timor-Leste pada 1999; dan *kedua*, mereka yang bertanggung jawab menyusun dan mengoordinasikan seluruh kebijakan yang membutuhkan penggalangan milisi dan penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil.

Dalam kategori pertama, yang bisa kita sebut sebagai ‘manajer’ kekerasan, mencakup: semua komandan milisi, semua Komandan Kopassus dan Komandan Sektor, sebagian besar (tidak semua) Komandan Distrik Militer (Dandim), sejumlah (tidak semua) Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Gubernur, dan sejumlah (tidak semua) Bupati.† Tidak diragukan bahwa banyak dari “manajer”

* East Timor, Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Indictment of Wiranto et al., Februari 2003.

† Dandim yang mungkin *tidak* termasuk dalam kategori ini adalah Dandim Aileu, Baucau, Manatuto (Letnan Kolonel Gerson Ponto), Manufahi, dan Viqueque. Kapolres yang *tidak* bisa dianggap sebagai ‘manajer’ kekerasan adalah Kapolres Aileu, Baucau, Ermera, Lautem, Liquiçá (Mayor Joko Irianto), Ma-

ini membantu dan bersekongkol, dan dalam beberapa kasus memerintahkan tindak pidana tertentu. Setidaknya, keterlibatan mereka itu berupa memajukan suatu ‘tujuan kriminal bersama’ yang mencakup pelaksanaan kejahatan terhadap umat manusia. Namun, bisa diajukan alasan yang kuat bahwa mereka tidak akan dan tidak dapat melakukan semua ini jika tidak ada kebijakan umum yang diawali dan dikoordinasikan oleh pejabat-pejabat tingkat lebih tinggi—yang dapat kita sebut sebagai ‘perencana.’

Dalam kategori kedua ini, para ‘perencana’ mencakup selusin, dan mungkin lebih, perwira tinggi TNI dan pejabat sipil tingkat Kabinet. Bukti yang dikemukakan dalam laporan ini menunjukkan bahwa perwira-perwira dan pejabat-pejabat berikut ini sangat mungkin terlibat dalam perencanaan, dan setidaknya mereka harus menjadi sasaran penyelidikan pidana lanjutan:

1. Mayor Jenderal Kiki Syahnakri
Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat; Penguasa Darurat Militer di Timor Timur
2. Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin
Asisten Teritorial Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia
3. Brigadir Jenderal Arifuddin
Direktur ‘A’ BAIS
4. Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim
Kepala BIA (sampai Januari 1999); Anggota, Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur
5. Mayor Jenderal Adam Damiri
Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana
6. Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon
Kepala Staf Komando Daerah Militer IX/Udayana
7. Kolonel Tono Suratman
Komandan Komando Resor Militer 164/WD (sampai 13 Agustus 1999)
8. Kolonel Noer Muis
Komandan Komando Resor Militer 164/WD (mulai 13 Agustus 1999)
9. Letnan Kolonel Yayat Sudrajat
Komandan Satgas Tribuana-VIII (Kopassus), Timor Timur
10. Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
11. Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono
Menteri Transmigrasi dan Pemukiman
12. Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah
Menteri Penerangan

natuto, Manufahi, dan Viqueque. Demikian juga, Bupati Baucau, Ermera, dan Manufahi harus dikeluarkan dari daftar ‘manajer’ kekerasan.

Penting untuk dicatat bahwa hampir semua perwira yang tercantum dalam daftar ini pernah ditugaskan bersama satuan-satuan Kopassus di Timor-Leste atau memiliki sejarah karier di Kopassus atau intelijen militer.⁷ Peran sangat penting perwira-perwira Kopassus dan intelijen di dalam kekerasan tahun 1999 itu sesuai dengan pola lama pertanggungjawaban atas pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor-Leste dan Indonesia, dan ini menunjukkan adanya masalah serius kelembagaan yang mendasar dalam angkatan bersenjata Indonesia. Karenanya, pengkajian yang memadai tentang sebab-sebab kekerasan 1999 dan tanggung jawab atasnya harus melampaui masalah tanggung jawab pidana individual, dan mengkaji pola-pola komando dan kontrol yang lebih luas dalam aparat militer dan negara Indonesia.

Tanggung jawab komando

Hukum internasional menyatakan bahwa, dalam keadaan tertentu, para komandan militer serta atasan kepolisian dan sipil dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan oleh bawahannya. Prinsip tersebut, yang secara umum disebut ‘tanggung jawab komando,’ dinyatakan di dalam Pasal 28 Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional.⁸ Asas yang sama juga disebutkan dalam hukum nasional Indonesia dan Timor Leste. Mengambil dari Statuta Roma, Pasal 16 dari Regulasi UNTAET No. 15/2000 menetapkan bahwa seorang komandan atau atasan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya jika ia:

“... mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahan tersebut akan atau telah melakukan tindakan itu, dan atasan itu gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah tindakan itu atau menghukum pelakunya.”⁹

Pada dasarnya, berdasarkan ‘tanggung jawab komando’ itulah para jaksa penuntut di Indonesia dan di Timor-Leste mendakwa sejumlah pejabat TNI, Polri, dan pemerintah sipil tingkat tinggi. Misalnya pada Februari 2003 Wakil Jaksa Agung Timor-Leste untuk Kejahatan Berat mengeluarkan satu surat dakwaan yang mendakwa tujuh perwira TNI—Jenderal Wiranto, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Adam Damiri, Kolonel Tono Suratman, Kolonel Noer Muis, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat—bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan para bawahan mereka, sesuai dengan Pasal 16 Regulasi UNTAET No. 15/2000.

* Mereka yang punya sejarah karier Kopassus dan/atau posisi intelijen mencakup: Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono, Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Brigadir Jenderal Arifuddin, Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon, Kolonel Tono Suratman, Kolonel Noer Muis, dan Letnan Kolonel Yayat Sudrajat.

† Teks lengkap Statuta Roma dapat ditemukan dalam situs jaringan Pengadilan Pidana Internasional: <http://www.un.org/law/icc/>.

‡ UNTAET Regulation No. 2000/15 (6 Juni 2000) “On the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction over Serious Criminal Offences.”

Bukti yang diajukan dalam laporan ini mendukung dakwaan tersebut. Laporan ini juga menunjukkan bahwa banyak perwira militer yang lain, dan pejabat kepolisian serta pemerintah sipil, agaknya juga mengemban tanggung jawab komando atas kejahatan yang dilakukan selama 1999. Sekitar 80 perwira dan pejabat yang diduga mengemban tanggung jawab tersebut disebutkan dalam Tabel 1. Penilaian tentang kesalahan mereka dibuat berdasarkan analisis mengenai bukti yang disampaikan dalam laporan ini, yang berhubungan dengan tiga unsur yang diperlukan untuk membuktikan 'tanggung jawab komando'—*pertama*, adanya hubungan atasan-bawahan; *kedua*, bahwa atasan mengetahui atau punya alasan untuk mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya; dan *ketiga*, bahwa atasan gagal melakukan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah kejahatan-kejahatan tersebut dan menghukum para pelakunya. Ketiga unsur tersebut dibahas di bawah ini.

Hubungan atasan-bawahan

Jalur wewenang militer, kepolisian, dan pemerintah sipil di Timor-Leste sangat kompleks dan sering tidak jelas. Jalur komando formal tidak selalu menandakan wewenang yang nyata atau yang berlaku. Oleh karena itu untuk menentukan apakah hubungan atasan-bawahan itu ada, diperlukan pengamatan lebih teliti baik terhadap jalur wewenang formal maupun informal yang berlangsung pada 1999.

Menurut hukum Indonesia, Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia pada 1999 adalah Presiden, B.J. Habibie.^{*} Prakarsa-prakarsa strategis penting, seperti keputusan untuk menyelenggarakan referendum di Timor-Leste dan pengumuman Keadaan Darurat pada 7 September 1999, memerlukan persetujuannya. Karena itu dapat dikemukakan argumen bahwa tanggung jawab komando paling tinggi untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota angkatan bersenjata Indonesia di Timor-Leste pada 1999, atau orang-orang yang beroperasi di bawah komando mereka, ada pada presiden.[†] Di lain pihak, ada keraguan besar apakah Presiden Habibie memang memiliki kekuasaan lebih daripada sekadar kontrol teoretis terhadap hierarki TNI pada 1999. Memang, seperti yang dicatat dalam bagian lain laporan ini, perwira-perwira tinggi TNI rupanya menentang kebijakan politik Habibie tentang Timor-Leste dan berusaha menggagalkannya. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk menyatakan bahwa Habibie memiliki komando efektif atas bawahannya dalam TNI, atau atas milisi.

Menurut hukum dan juga dalam praktiknya, tanggung jawab komando atas satuan-satuan TNI di Timor-Leste terletak pada Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Wiranto. Sebagai Panglima TNI, Jenderal Wiranto berada di puncak jalur komando teritorial militer yang merentang melalui Panglima Kodam IX/Udayana, Mayor Jenderal Adam Damiri, dan Kepala Stafnya, Brigadir

* Kedudukan Presiden sebagai Panglima Tertinggi dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan tahun 1983 dan suatu Keputusan Presiden yang dikeluarkan pada 1983.

† Sebenarnya, sebagian dari yang telah diadili sejak tahun 1999 (misalnya Kolonel Timbul Silaen dan Eurico Guterres) telah menegaskan bahwa tanggung jawab utama untuk kekerasan di Timor Timur berada pada Habibie.

Jenderal Mahidin Simbolon, ke Komandan Korem 164/Wira Dharma, Kolonel Tono Suratman dan Kolonel Noer Muis, Wakil Komandan Korem, Kolonel Mudjiono, dan Kepala Staf Korem, Letnan Kolonel Supadi, serta di bawah mereka, 13 Komandan Kodim, 62 Komandan Koramil, dan 442 Babinsa di tingkat desa. Di dalam rantai komando teritorial ini, para perwira komandan di setiap tingkat bertanggung jawab langsung atas tindakan para perwira dan prajurit yang berada di tingkat lebih rendah. Seperti yang sudah diperkirakan, ada variasi di dalam wewenang efektif sejumlah komandan, dan pertanyaan telah dikemukakan mengenai wewenang Jenderal Wiranto terhadap sejumlah bawahannya. Namun, secara luas rantai komando teritorial resmi ini mencerminkan hubungan atasan-bawahan yang nyata.

Sebagian besar kesatuan TNI lain yang ditugaskan di Timor-Leste pada 1999—seperti Batalion Infanteri 744 dan 745 yang berpangkalan tetap di sana, dan berbagai batalion tempur yang dikirim bertugas di sana dalam waktu tertentu—juga beroperasi di dalam rantai komando ini. Namun, ada beberapa pengecualian penting. Dua pasukan tempur elite, Kopassus dan Kostrad, langsung berada di bawah komando markas besar mereka masing-masing di Jakarta. Dengan demikian, jika kejahatan dilakukan atau diperlancar oleh para perwira atau prajurit Kopassus dan Kostrad, tanggung jawab komando bisa jadi secara formal tidak terletak pada perwira di dalam rantai komando teritorial (Kodam, Korem, Kodim, dan sebagainya) tetapi pada komandan kesatuan-kesatuan tersebut, seperti komandan Kopassus di Timor-Leste Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, pada komandan-komandan tertinggi mereka di Jakarta, yaitu Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal Syahrir dan Panglima Kostrad Letnan Jenderal Djamari Chaniago, dan akhirnya Jenderal Wiranto. Status dari kesatuan-kesatuan yang dikelompokkan di dalam Sektor Tempur TNI A dan B di Timor-Leste kurang jelas. Namun sebagai perwira Kopassus, para komandan Sektor tampaknya beroperasi di luar rantai komando teritorial normal, dan bertanggung jawab kepada komandan mereka dalam Kopassus.

Sejumlah perwira tinggi di markas besar Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia, dan BIA/BAIS agaknya juga memiliki tanggung jawab komando efektif terhadap perwira-perwira rendah dan pasukan-pasukan di Timor-Leste. Di markas besar Angkatan Darat di Jakarta para perwira kunci meliputi: Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo dan Asisten Operasinya (yang kemudian juga menjadi Penguasa Keadaan Darurat), Mayor Jenderal Kiki Syahnakri. Di markas besar Tentara Nasional Indonesia, para tokoh utamanya adalah: Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal Sugiono; Asisten Teritorial, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin; dan Asisten Operasi, Mayor Jenderal Endriartono Sutarto. Di dalam BIA/BAIS, tokoh sentral pada 1999 adalah Kepala BIA/BAIS, Letnan Jenderal Tyasno Sudarto, Direktur 'A', Brigadir Jenderal Arifuddin, dan Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, Kepala BIA sampai Januari 1999 dan sesudah itu anggota senior Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Wewenang administratif atas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara formal ada di tangan Jenderal Wiranto, dalam kedudukannya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Tetapi, tanggung jawab komando operasional terletak di tangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal (Pol.)

Roesmanhadi. Di bawahnya, rantai komando Polri selanjutnya turun melalui Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur, Kolonel Timbul Silaen, ke Kepala Kepolisian yang ada di 13 kabupaten, 62 kecamatan, dan 442 desa. Brigade Mobil (Brimob) Polri dan kesatuan-kesatuan Polri lainnya yang secara khusus ditugaskan di Timor-Leste untuk Konsultasi Rakyat berada di bawah komando Kepala Kepolisian Daerah.^{*}

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian lain laporan ini, wewenang para pejabat Polri dibatasi oleh TNI. Ini terutama dalam hal tindakan Polri terhadap prajurit TNI dan milisi. Para pejabat Polri yang berusaha menghentikan kekerasan TNI atau milisi kemudian menjadi sasaran pembalasan, dan sebagian dari mereka dibunuh. Walaupun demikian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kepolisian Resor memegang wewenang efektif atas polisi bawahan mereka masing-masing dan, dalam beberapa kasus, memegang pula wewenang efektif atas kelompok-kelompok milisi.[†]

Jalur wewenang di dalam aparat pemerintah sipil di Timor-Leste serupa, bercampur baur juga. Wewenang Gubernur, Abilio Osório Soares, 13 bupati, dan ratusan pejabat pemerintah sipil yang lebih rendah juga dibatasi oleh TNI. Walaupun demikian, gubernur dan bupati juga punya kendali nyata terhadap bawahannya, dan beberapa bahkan memegang kedudukan dengan wewenang tertentu dalam kelompok-kelompok milisi. Dengan demikian, walaupun gubernur dan bupati bukan merupakan tokoh paling kuat di dalam struktur kekuasaan, mereka memiliki wewenang terhadap bawahan mereka.

Di tingkat nasional, beberapa Menteri Kabinet terlibat di dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah tentang Timor-Leste, dan memiliki wewenang efektif atas beberapa kelompok pro-Indonesia. Mereka mencakup: Menteri Transmigrasi dan Pemukiman, Letnan Jenderal (Purn.) Hendropriyono; Menteri Penerangan, Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah; dan Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung. Di antara mereka, Letnan Jenderal Feisal Tanjung sudah pasti memiliki wewenang terbesar, baik secara formal maupun informal. Dalam kedudukannya sebagai Menteri Koordinator, Tanjung secara efektif membentuk dan mengawasi pelaksanaan strategi politik tentang Timor-Leste. Sebagai menteri yang bertanggung jawab atas Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur, ia juga berada di puncak jaringan para perwira dan pejabat, yang mencakup Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang diyakini mengendalikan kelompok-kelompok milisi Timor-Leste.[‡]

* Satu-satunya perkecualian terhadapnya terjadi ketika pasukan Brimob secara resmi ditempatkan di bawah komando (BKO) TNI, yang dalam hal ini tanggung jawab komando keseluruhan dialihkan kepada seorang perwira TNI.

† Para pejabat Polri yang memiliki wewenang nyata terhadap kelompok-kelompok milisi meliputi: Kepala Kepolisian Daerah, Kolonel Timbul Silaen dan para Kepala Kepolisian Resor di Kabupaten Ainaro, Bobonaro, Covalima, Dili, Liquiçá (Letnan Kolonel Adios Salova), dan Oecussi.

‡ Bersaksi di pengadilan terhadap dirinya di Jakarta, mantan Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur Kolonel Timbul Silaen mengatakan bahwa Letnan Jenderal Tanjung yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban untuk kekerasan pada 1999. "Yang bertanggung jawab untuk bidang keamanan di tingkat nasional adalah Feisal Tanjung dan Wiranto. Saya hanya perwira lapangan ..." Dikutip dalam *Jakarta Post*, 25 April 2002.

Rantai komando militer, kepolisian, dan pemerintah sipil ini berlaku selama sebagian besar 1999. Namun, rantai komando ini mengalami dua perubahan penting segera setelah periode pemungutan suara. Pertama, pada 4 September 1999, TNI mengambil komando atas seluruh operasi keamanan di Timor-Leste, dan menurunkan Polri dan pemerintah sipil pada peran pendukung.⁷ Pengaturan baru ini dilembagakan di bawah satu struktur komando yang diberi nama “Ko-ops Nusra” (Komando Operasi TNI Nusa Tenggara) di bawah komando Mayor Jenderal Damiri.⁸

Perubahan kedua terjadi tepat tengah malam 7 September 1999, ketika Keadaan Darurat secara resmi diumumkan di Timor-Leste.⁹ Sejak itu, sampai dengan akhir September 1999 ketika Keadaan Darurat dicabut, berlaku satu rantai komando yang sangat berbeda. Selama periode tersebut semua operasi militer, kepolisian, dan pemerintah sipil di Timor-Leste secara resmi berada di bawah kendali Penguasa Darurat Militer, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, yang bertanggung jawab kepada Jenderal Wiranto dan, menurut teorinya, kepada Presiden Habibie sebagai Panglima Tertinggi.¹⁰

Dengan begitu, pada prinsipnya bisa ditentukan dengan ketepatan tertentu perwira dan pejabat yang mana yang memikul tanggung jawab komando keseluruhan atas tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan bawahan mereka pada waktu tertentu dalam 1999. Sebagai contoh, tanggung jawab untuk kejahatan yang dilakukan sebelum 4 September 1999 ada di tangan TNI, dan dalam beberapa kasus di tangan Polri dan pejabat sipil, atau gabungan dari ketiganya. Tanggung jawab komando untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jangka waktu 4-7 September 1999 ada di tangan para perwira TNI dalam rantai komando normal, tetapi bukan pada pejabat Polri atau pemerintah sipil. Tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan setelah pukul 00.00 pada 7 September secara resmi ada di tangan para perwira TNI, dan khususnya Penguasa Darurat Militer Mayor Jenderal Kiki Syahnakri.

Namun dalam praktiknya, penetapan tanggung jawab komando selama masa ini agak lebih rumit, terutama karena mereka yang memegang jabatan resmi tidak selalu memegang komando efektif atas para bawahan mereka.

.....
⁷ Jenderal Wiranto bersaksi bahwa perubahan terjadi pada 5 September 1999, tetapi dokumen-dokumen waktu itu menyiratkan bahwa perubahan terjadi pada 4 September. Lihat: Telegram rahasia kepada Kepala Staf Umum TNI (No. B/01/IX/1999), 4 September 1999, ditandatangani oleh Mayor Jenderal Damiri sebagai “Panglima Komando Operasi TNI Nusra” (Koleksi Yayasan HAK, Doc #47).

⁸ Bersaksi di pengadilan terhadap Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur Kolonel Timbul Silaen, Jenderal Wiranto menjelaskan bahwa keputusan itu diambil di markas besar TNI karena dinilai bahwa Polri tidak akan mampu mengendalikan keadaan. Lihat *Jakarta Post*, 9 April 2002.

⁹ Keputusan Presiden memberlakukan Keadaan Darurat itu bertanggal 6 September 1999. “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999, tentang Keadaan Darurat Militer di Timtim.”

¹⁰ Wewenang Penguasa Darurat Militer dinyatakan dalam satu surat perintah yang dikeluarkan oleh Jenderal Wiranto bertanggal 20 September 1999. Lihat: Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI, “Surat Keputusan Nomor Skep/821/P/IX/1999, tentang Ketentuan Penggunaan Wewenang Penguasa Darurat Militer Daerah Timor Timur” (Koleksi HRU, Doc. TNI #10).

Masalah ini paling jelas dalam kasus Penguasa Darurat Militer, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri. Walaupun pengangkatan resminya menjadi Penguasa Darurat Militer berlaku mulai pukul 00.00 tanggal 7 September, namun ia tidak memegang komando efektif sampai beberapa hari kemudian, mungkin sampai malam 9 September. Sampai dengan saat itu tanggung jawab komando secara efektif berada di tangan Mayor Jenderal Adam Damiri dalam kedudukannya sebagai Panglima Ko-ops Nusra. Ini tidak berarti bahwa Syahnakri lepas dari masalah. Sebaliknya, sebagai Penguasa Darurat Militer ia jelas mengemban tanggung jawab komando untuk banyak kejahatan yang dilakukan oleh pasukan TNI, Polri, dan milisi setelah 9 September. Lebih jauh, ia kemungkinan juga mengemban tanggung jawab individual dan komando untuk perannya di dalam menggalang dan mendukung milisi jauh sebelum pemberlakuan Keadaan Darurat.

Kesulitan yang agak lain berpengaruh pada penilaian tentang kesalahan sedikitnya dua perwira lain TNI: Jenderal Wiranto dan Kolonel Noer Muis. Sebagaimana telah dikemukakan di bagian lain laporan ini, ada pendapat bahwa Wiranto dan Muis tidak punya kontrol efektif terhadap setidaknya beberapa perwira dan prajurit yang secara resmi berada di bawah komando mereka, khususnya dalam periode segera setelah pemungutan suara. Jika memang demikian, tanggung jawab mereka untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bawahan mereka menjadi terbuka untuk dipertanyakan. Akan tetapi, jika tindakan-tindakan yang disebutkan itu dipandang sebagai kelanjutan dari kebijakan yang telah lama ada yang melanggar hukum internasional, dan yang mengenainya perwira-perwira itu memikul tanggung jawab, kasus untuk pertanggungjawaban mereka akan menjadi lebih kuat lagi. Argumen seperti itu bisa berlaku untuk Jenderal Wiranto.

Kasus-kasus ini mengingatkan bahwa wewenang komando efektif tidak jelas dengan sendirinya begitu saja, tetapi harus dibuktikan. Hal yang sama berlaku bagi klaim mengenai ketiadaan wewenang efektif. Klaim semacam itu telah digunakan, secara tidak jujur, sebagai satu strategi pembelaan hukum oleh beberapa perwira TNI dan Polri yang didakwa dan diadili di pengadilan Indonesia. Misalnya, dalam pengadilan terhadap dirinya pada Juli 2002, Mayor Jenderal Adam Damiri menolak semua dakwaan terhadap dirinya karena ia “tidak berada di lapangan” pada saat kejadian yang dipersoalkan.^{*} Penolakannya akan tanggung jawab komando didukung oleh Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang memberikan kesaksian bahwa Damiri tidak memiliki “komando efektif” atas pasukan-pasukan di lapangan, dan oleh karena itu “tidak dapat diadili untuk sesuatu yang dilakukan oleh prajurit TNI di Timor Timur.”[†]

Pengakuan-pengakuan itu sungguh tidak benar, terutama paling jelas untuk hari-hari kritis awal September ketika Damiri menjadi Panglima Ko-ops Nusra dan kenyataannya berada di lapangan di Timor-Leste.[‡] Lebih jauh lagi pengakuan-pengakuan itu

^{*} *Jakarta Post*, 11 Juli 2002.

[†] *Suara Timor Lorosae*, 12 September 2002.

[‡] Kepala UNAMET, Ian Martin, menemui Mayor Jenderal Damiri di Dili pada sedikitnya dua kesempatan dalam periode tersebut, pada tanggal 2 dan 8 September 1999. Komunikasi pribadi, 4 Juni 2003.

bertentangan dengan pernyataan berulang-ulang dari pihak berwenang Indonesia selama 1999 bahwa pasukan TNI sangat disiplin dan bahwa pihak berwenang sepenuhnya mengendalikan keadaan keamanan.* Seperti yang dicatat oleh Komisi Penyelidik Internasional di Timor Leste dalam laporannya pada Januari 2000:

“Sepanjang [1999] Pemerintah ... memberikan jaminan berulang kali kepada PBB dan rakyat Timor-Leste bahwa pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan untuk menjamin keamanan dan memelihara hukum dan ketertiban. Tidak sekalipun Pemerintah Indonesia mengungkapkan ketidakmampuannya untuk melakukan hal tersebut atau keinginannya untuk menyerahkan tanggung jawab ini.”

Di luar persoalan wewenang formal dan efektif ini, penentuan tanggung jawab komando untuk kejahatan terhadap umat manusia terletak pada dua kriteria lain: apakah seorang perwira atasan mengetahui atau punya alasan untuk mengetahui kejahatan yang dipersoalkan, dan apakah perwira atasan itu melakukan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah kejahatan yang terjadi dan menghukum para pelakunya. Dalam bahasa Regulasi UNTAET No. 15/2000, seorang komandan atau atasan dapat dianggap bertanggung jawab untuk tindak pidana yang dilakukan seorang bawahan hanya jika ia “mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa bawahan tersebut akan atau telah melakukan tindakan itu, dan atasan itu gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah tindakan itu atau menghukum pelakunya.”[‡]

“Mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui”

Apakah para perwira dan pejabat dalam rantai komando mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui, akan keterlibatan bawahannya dalam kekerasan yang luas dan sistematis pada 1999? Jawabannya adalah bahwa, tanpa keraguan, para komandan penting punya alasan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Lebih lanjut, dalam beberapa kasus tertentu bisa dibuktikan bahwa mereka mengetahuinya.[§]

* Misalnya, ketika ditanya pada awal 1999 apakah ia bisa memercayai semua bagian angkatan bersenjata Indonesia, Menteri Luar Negeri Ali Alatas menjawab: “Ya, angkatan bersenjata kami sungguh sangat berdisiplin.” Lihat ABC, *Four Corners*, “A License to Kill,” 15 Maret 1999, transkrip, halaman 14.

† United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, “Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary General,” Januari 2000, paragraf 64.

‡ UNTAET Regulation No. 2000/15 (6 Juni 2000) “On the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction Over Serious Criminal Offences.”

§ Indikator-indikator yang ditunjukkan oleh Komite Pakar PBB mengenai Bekas Yugoslavia di dalam menentukan apakah seorang perwira tinggi mengetahui kejahatan yang dilakukan adalah: jumlah, jenis, dan lingkup dari tindakan-tindakan ilegal; waktu terjadinya tindakan-tindakan ilegal itu; logistik yang digunakan; luasnya kejadian dari tindakan-tindakan tersebut; lokasi geografis dari tindakan-tindakan tersebut; *modus operandi* dari tindakan-tindakan ilegal yang sama; perwira dan staf yang terlibat; dan tempat keberadaan komandan pada saat kejadian.

Kasus umum bahwa para perwira dan pejabat penting memiliki alasan untuk mengetahui kejahatan yang dilakukan dikemukakan dalam surat dakwaan Wakil Jaksa Agung yang dikeluarkan pada Februari 2003 terhadap Jenderal Wiranto dan lain-lain. Khusus mengenai Jenderal Wiranto, surat dakwaan itu menyebutkan:

“211. Selama tahun 1998 dan 1999 WIRANTO sering melakukan perjalanan ke Timor Leste. Selama kunjungan tersebut dia bertemu dengan para tokoh masyarakat Timor Leste, anggota pers dan pejabat yang mewakili masyarakat internasional, termasuk Pejabat Hubungan Militer dan pejabat lain dari Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste [UNAMET].

212. Pada pertemuan-pertemuan ini dia berulang kali diberitahu akan tindak kekerasan dan kejahatan lain yang dilakukan oleh TNI dan kelompok milisi di Timor Leste. Pada pertemuan ini terdapat permintaan agar dia mengendalikan TNI dan kelompok-kelompok milisi yang melakukan kejahatan tersebut.”

Surat dakwaan tersebut juga membuat tuduhan serupa terhadap perwira-perwira TNI yang lain: Zacky Anwar Makarim, Kiki Syahnakri, Adam Damiri, Tono Suratman, Noer Muis, dan Yayat Sudrajat. Lebih lanjut, karena struktur militer, kepolisian, dan pemerintah sipil yang diuraikan secara ringkas dalam bagian sebelumnya, cukup alasan untuk menganggap bahwa pengetahuan mengenai kejahatan yang dilakukan itu tidak hanya ada pada orang-orang ini, tetapi mencakup banyak dari orang-orang yang menduduki posisi-posisi komando penting. Pernyataan tersebut didukung oleh butir-butir fakta berikut ini, yang semuanya telah diuraikan dalam bagian lain laporan ini.

Antara Juni dan Oktober 1999, para pejabat senior UNAMET secara teratur memberikan penjelasan tertulis maupun lisan mengenai pola-pola umum, dan kejadian-kejadian tertentu, kekerasan kepada para pejabat tingkat tinggi TNI, Polri, dan pemerintah sipil. Penjelasan-penjelasan ini berulang-kali mempertegas bukti mengenai hubungan erat antara TNI dan milisi.[†] Penjelasan dan pengaduan juga secara rutin disampaikan kepada pejabat yang berwenang Indonesia oleh

.....
* Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, 22 Februari 2003.

† Penjelasan tertulis yang diberikan oleh pejabat-pejabat UNAMET mencakup: dua berkas bukti tentang penyalahgunaan dana pemerintah dan penggunaan desakan jabatan untuk mendukung kampanye pro-otonomi, disampaikan kepada pemerintah Indonesia pada 16 Juni dan 14 Juli 1999; laporan terperinci tentang insiden Maliana pada 29 Juni, dan insiden Liquiçá pada 4 Juli, diserahkan kepada pemerintah pada pertengahan Juli 1999; surat bertanggal 5 Agustus dari kepala misi UNAMET Ian Martin kepada Ketua Satuan Tugas Tarmidzi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam tentang serangan terhadap staf UNAMET, dan tentang kemungkinan perilaku kriminal dari para pejabat pemerintah daerah di Bobonaro; sepucuk surat bertanggal 19 Agustus, dari Ian Martin kepada Tarmidzi, dan sepucuk surat lain dari Kepala Perwira Penghubung Militer UNAMET, Brigadir Jenderal Rezaq kepada Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, yang menguraikan keterlibatan para perwira TNI yang disebutkan namanya dalam mendukung milisi, dan meminta pemindahan para perwira tersebut. Komunikasi pribadi, Ian Martin, 4 Juni 2003.

perwakilan berbagai pemerintah, organisasi-organisasi internasional seperti Amnesty Internasional dan Human Rights Watch, serta organisasi-organisasi nonpemerintah setempat seperti Fokupers dan Yayasan HAK. Dugaan dan informasi terperinci tentang kekerasan juga berlimpah dalam media Timor-Leste, Indonesia, dan internasional.

Selain informasi yang mereka terima dari sumber-sumber luar semacam itu, para pejabat tinggi Indonesia sering menerima laporan lisan maupun tertulis tentang keadaan di Timor-Leste melalui hierarki komandonya sendiri. Seperti yang dilaporkan dikatakan Jenderal Wiranto kepada para penyelidik Indonesia pada Desember 1999: “Tentu, saya menerima laporan secara teratur dan saya mempelajari laporan-laporan tersebut, dan pada saat-saat kritis laporan itu diteruskan kepada Presiden.”^{*} Walaupun laporan-laporan internal ini kebanyakan tidak menyinggung persoalan keterlibatan langsung TNI dengan milisi, beberapa di antaranya menyebutkan adanya hubungan, dan menguraikan kekerasan secara terperinci.[†]

Singkatnya, jelas bahwa banyak dari mereka yang berada dalam posisi tanggung jawab komando, sampai pada dan termasuk pejabat-pejabat tertinggi di negeri itu mengetahui, atau punya alasan untuk mengetahui, mengenai kekerasan kriminal di Timor-Leste dan mengenai keterlibatan bawahan mereka dalam kekerasan tersebut. Kesimpulan ini kuat mendukung tuduhan yang dibuat dalam surat dakwaan terhadap Wiranto dan enam perwira TNI lainnya yang dikeluarkan oleh Wakil Jaksa Agung Timor-Leste pada Februari 2003. Kesimpulan ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan—dan kemungkinan pertanggungjawaban komando bagi mereka—tidak terbatas pada tujuh perwira yang disebut dalam surat dakwaan tersebut, tetapi mencakup puluhan pejabat tinggi lainnya dari TNI, Polri, dan pemerintah sipil.

“Tindakan yang diperlukan dan mencukupi”

Karena para pejabat senior TNI, Polri, dan pemerintah sipil dalam rantai komando mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui, mengenai kekerasan,

^{*} Dikutip dalam Kevin O'Rourke, *Reformasi: The Struggle for Power in Post Soeharto Indonesia*, Sydney: Allen & Unwin, 2002, halaman 352.

[†] Laporan-laporan itu mencakup: satu telegram rahasia TNI dari Kolonel Suratman, bertanggal 28 Januari 1999, menguraikan beberapa pembunuhan terhadap penduduk sipil yang belum lama dilakukan oleh milisi (Koleksi Yayasan HAK, Doc #7); satu telegram rahasia TNI, bertanggal 18 April 1999 menguraikan kekerasan milisi yang luas di Dili pada 17 April 1999 yang dalam kekerasan tersebut 13 orang penduduk sipil dibunuh (Koleksi Yayasan HAK, Doc #16); satu telegram rahasia TNI bertanggal 21 April 1999, dari Kepala Staf Korem 164 mengenai beberapa kasus keterlibatan langsung TNI dalam pembunuhan di luar hukum, dan menyebutkan secara khusus ditemukannya dua mayat manusia di Triloka, Baucau (Koleksi Yayasan HAK Doc #48); “Laporan Garnadi” rahasia, bertanggal 3 Juli 1999 yang menyebutkan milisi sebagai ‘pahlawan integrasi’ (Koleksi Yayasan HAK, Doc #35); satu telegram rahasia TNI bertanggal 31 Agustus 1999, menguraikan pembunuhan terhadap dua orang staf UNAMET di Boboe Leten, tanggal 30 Agustus 1999 (Koleksi Yayasan HAK, Doc #42); sepucuk surat dari Jenderal Wiranto kepada Presiden Habibie, bertanggal 6 September 1999, menguraikan kekerasan dan penghancuran luas di Timor Timur, dan menyebutkan hubungan emosional yang dekat antara TNI dan milisi sebagai satu faktor yang menghambat tindakan tegas terhadap milisi (Koleksi HRU, Doc. TNI #7).

persoalan tanggung jawab komando untuk kekerasan tersebut bergantung pada apakah, dalam bahasa Regulasi UNTAET No. 15/2000, para perwira tersebut melakukan “tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk mencegah tindak kekerasan tersebut atau menghukum para pelakunya.” Jawabannya adalah bahwa, dengan sedikit pengecualian, orang-orang yang memiliki wewenang itu tidak melakukannya.’ Sesungguhnya, seperti yang ditunjukkan laporan ini, para pejabat TNI dan Polri secara konsisten mendorong atau sedikitnya membiarkan tindakan-tindakan kekerasan itu dan hanya sedikit dari para pelaku yang pernah ditahan atau diadili.

Kegagalan yang sangat penting ini secara substansial memperkuat pendapat bahwa tanggung jawab komando atas kekerasan terletak di tangan para perwira TNI, dan pada tingkat yang lebih rendah di tangan para pejabat tinggi sipil dan Polri. Bukti-bukti juga sangat mendukung tuduhan di dalam surat dakwaan Wakil Jaksa Agung Timor-Leste Februari 2003 terhadap Wiranto dan lain-lain bahwa:

“Selama tahun 1999 WIRANTO [dan terdakwa lainnya] gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan yang layak untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya dan dia gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan yang layak untuk menghukum para pelaku kejahatan tersebut.”[†]

Satu kemungkinan penjelasan tentang kegagalan para pejabat untuk menghentikan kejahatan atau menghukum para pelakunya adalah karena mereka tidak memiliki kemampuan material untuk melakukannya. Seperti yang sudah dikemukakan, hal itu kemungkinan yang terjadi pada sebagian besar pejabat sipil di Timor-Leste karena, dengan beberapa pengecualian, wewenang efektif mereka terhadap milisi dan para prajurit TNI sangat dibatasi oleh TNI. Walaupun demikian, gubernur dan 13 bupati memiliki kemampuan material dan tanggung jawab untuk menghentikan dan menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bawahan sipil mereka. Hal yang sama juga terjadi pada para pejabat Polri. Kemampuan mereka untuk menghentikan dan menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para prajurit TNI dan milisi dibatasi oleh subordinasi efektif Polri pada TNI. Meskipun demikian, Kepala Kepolisian Daerah dan 13 Kepala Kepolisian Resor memiliki kemampuan material untuk menghentikan dan menghukum tindakan tidak sah yang dilakukan oleh petugas-petugas polisi bawahan mereka dan, dalam beberapa kasus, oleh kelompok-kelompok milisi.

* Menurut pernyataan Mayor General Peter Cosgrove, Panglima INTERFET, pada akhir 1999: “Buktinya adalah bahwa berlangsung kekerasan yang luas dan tak terkendali yang dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi dan itu menunjukkan bahwa tingkat kontrol atas hukum dan ketertiban biasa [dan] kejahatan-kejahatan kekerasan yang sedang dilakukan oleh TNI, tidak memadai.” Dikutip dalam ABC, *Four Corners*, “The Vanishing,” 18 Oktober 1999, transkrip, halaman 10.

† Timor-Leste, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Berat, Surat Dakwaan Wiranto dan lain-lain, Februari 2003, paragraf 213.

Kurangnya kemampuan material bukanlah masalah bagi sebagian besar komandan TNI. Sebaliknya, seperti yang ditunjukkan secara meyakinkan di dalam laporan ini, para perwira TNI bisa mengontrol waktu, sebaran wilayah, dan karakter kekerasan dengan ketepatan luarbiasa. Karena menggalang milisi dan menyediakan pelatihan, senjata, dukungan finansial, dan logistik bagi mereka, para pejabat TNI berada pada posisi untuk menjalankan kontrol yang kuat atas tindakan-tindakan milisi. Kontrol mereka atas para prajurit TNI, dengan sedikit perkecualian, bahkan lebih pasti lagi. Jika saja para komandan senior berniat menghentikan kekerasan selamanya dan menghukum para pelakunya, mereka dapat melakukannya tanpa kesulitan. Dalam suatu pertemuan dengan Ian Martin pada 7 Juli 1999, Jenderal Wiranto mengatakan bahwa jika Falintil bersedia menyerahkan senjata mereka kepada polisi Indonesia, ia bisa menjamin bahwa milisi akan dilucuti dalam waktu dua hari.*

Harus dicatat bahwa sejumlah perwira TNI melakukan tindakan yang mereka klaim ditujukan untuk menghentikan atau mengendalikan kekerasan. Misalnya, dalam beberapa kesempatan pada 1999, Kolonel Tono Suratman memerintahkan bawahannya untuk meningkatkan pengawasan terhadap kelompok-kelompok milisi, melucuti senjata mereka, dan menghentikan operasi bersama TNI-milisi.† Pada pertengahan Agustus 1999, rupanya untuk menanggapi tekanan internasional, Jenderal Wiranto mengganti Komandan Korem Kolonel Tono Suratman dengan Kolonel Noer Muis, dan mengganti Komandan Kodim Bobonaro dan Covalima.‡ Menurut laporan-laporan, Presiden Habibie maupun Jenderal Wiranto secara berkala menegur perwira-perwira TNI yang bertugas di Timor-Leste karena gagal mengendalikan milisi.§ Presiden Habibie memberlakukan Keadaan Darurat, atas saran Jenderal Wiranto, sebagai langkah untuk memulihkan hukum dan ketertiban. Terakhir, menurut sejumlah kesaksian, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri dan Letnan Kolonel Noer Muis, berusaha, namun tidak berhasil, untuk mengendalikan kekerasan selama masa Keadaan Darurat.

Jika dilihat begitu saja, berbagai inisiatif ini menunjukkan bahwa ada usaha yang dilakukan oleh sejumlah komandan—Kolonel Tono Suratman, Jenderal Wiranto, Presiden Habibie, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, dan Kolonel Noer Muis—untuk membendung tindakan milisi, mengendalikan TNI, dan membatasi kekerasan. Klaim ini memerlukan pembahasan lebih lanjut, baik demi bersikap adil kepada para pejabat yang terlibat, maupun untuk membantu memperjelas masalah tanggung jawab komando.

* Pertemuan tersebut dilangsungkan di Jakarta. Komunikasi pribadi, Ian Martin, 4 Juni 2003.

† Untuk perinciannya, lihat Bab 4 dan 7 laporan ini.

‡ "Indonesia Changes Military Command in East Timor," AFP, 13 Agustus 1999. Dijelaskan kepada UN-AMET bahwa perubahan-perubahan ini merupakan bagian dari satu usaha untuk menjalankan kontrol pusat terhadap militer dan milisi di Timor Timur. Komunikasi pribadi, Ian Martin, 20 November 2000.

§ *Peristiwa*, 21 Juli 1999.

Harus dikatakan bahwa sebagian dari inisiatif yang disebutkan jelas bukan merupakan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk menghentikan kejahatan atau menghukum para pelaku. Sebagaimana yang telah diperinci dalam bagian lain laporan ini, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kolonel Tono Suratman tidak lebih daripada gerakan taktis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan politik jangka pendek, baik dengan menyembunyikan sifat hubungan milisi-TNI dari pengamatan delegasi luar negeri, atau dengan menjawab tekanan internasional yang semakin meningkat agar diambil tindakan, tetapi tanpa menghentikan secara efektif kekerasan yang sudah direncanakan. Lebih jauh, tidak ada bukti bahwa Kolonel Tono Suratman pernah melakukan satu usaha yang sungguh-sungguh untuk menghukum para pelaku kejahatan.

Ada lebih banyak debat tentang inisiatif-inisiatif lain yang dicatat di atas, termasuk pemindahan beberapa perwira TNI pada Agustus 1999, keputusan untuk memberlakukan Keadaan Darurat, dan upaya-upaya yang disebutkan dilakukan untuk mengendalikan kekerasan selama masa Keadaan Darurat. Sebagian pengamat beranggapan bahwa tindakan-tindakan ini tak lebih daripada sekedar tabir asap yang dimaksudkan untuk menipu atau mengalihkan pendapat internasional. Untuk mendukung pandangan tersebut, bisa diingat bahwa tindakan-tindakan tersebut samasekali tidak efektif dan, dalam hal Keadaan Darurat, bersamaan dengan berlangsungnya pemburuan—bukannya perbaikan—keamanan. Lagi pula, seperti halnya usaha Kolonel Tono Suratman, inisiatif-inisiatif lain ini tidak mencakup penghukuman terhadap orang-orang yang diketahui sebagai pelaku kejahatan.

Pengamat-pengamat lain menyatakan bahwa usaha menghentikan kekerasan ini memang sungguh-sungguh, tetapi gagal karena perlawanan yang kuat dari para anggota milisi serta prajurit dan perwira TNI. Jika penafsiran ini benar—dan ini masih tetap merupakan satu persoalan yang terbuka—maka ini akan cenderung membatasi tanggung jawab pada beberapa perwira tertentu untuk sebagian kejahatan yang dilakukan oleh para bawahan mereka. Namun, penafsiran ini tidak akan memengaruhi kesimpulan umum di sini bahwa perwira-perwira tinggi TNI gagal melakukan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk menghentikan kejahatan terhadap umat manusia atau menghukum para pelakunya.

Singkatnya, bukti yang dikemukakan dalam laporan ini menunjukkan bahwa sebagian besar, walaupun mungkin tidak semua, perwira TNI yang berada di dalam rantai komando, sebagaimana juga sebagian pejabat tinggi Polri dan pemerintah sipil, mengetahui, atau memiliki alasan untuk mengetahui kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bawahan mereka, dan memiliki kemampuan material untuk menghentikan kejahatan-kejahatan tersebut dan menghukum para pelakunya, namun gagal untuk melakukan tindakan yang diperlukan dan mencukupi untuk itu. Karena itu, bukti-bukti bukan hanya dengan kuat mendukung tuduhan yang dibuat dalam surat dakwaan yang dibuat di Timor-Leste pada Februari 2003 terhadap Wiranto dan lain-lain, namun juga menunjukkan bahwa tanggung jawab komando tidak hanya terbatas pada orang-orang yang namanya tercantum dalam surat dakwaan tersebut.

Menghadapi meningkatnya bukti mengenai keterlibatan TNI di dalam kekerasan tersebut, pada akhir 1999 Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menyatakan bahwa, di luar milisi, tanggung jawab untuk kekerasan besar-besaran di Timor-Leste mungkin terletak di tangan 'oknum-oknum' tertentu di dalam TNI. "Kami mengakui", katanya, "bahwa ada oknum-oknum [yang] telah mendukung sebagian tindakan milisi." Bukti-bukti yang dikemukakan dalam laporan ini menyangkal klaim bahwa keterlibatan pejabat hanya terbatas pada 'oknum-oknum' itu. Sebaliknya, bukti-bukti menunjukkan bahwa yang bertanggung jawab mencakup banyak pejabat tertinggi militer, kepolisian, dan pemerintah sipil di Indonesia.

Dari perspektif hukum internasional dan nasional, ada dua jenis pihak yang bertanggung jawab yang bisa diidentifikasi. Pertama, mereka yang mengemban 'tanggung jawab pidana individual' baik karena secara langsung melakukan kejahatan ataupun karena membantu orang lain melakukannya. Kedua, mereka yang mengemban 'tanggung jawab komando' karena gagal menghentikan atau menghukum kejahatan yang dilakukan oleh bawahan mereka. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang sudah diterima luas ini, laporan ini mengidentifikasi sekitar 80 pejabat TNI, Polri, dan pemerintah sipil yang kemungkinan bertanggung jawab atas kejahatan terhadap umat manusia, dan karena itu harus menjadi fokus penyelidikan pidana lanjutan.

Tanggung jawab internasional

Tanggung jawab para pejabat Indonesia sesungguhnya hanya sebagian dari cerita. Status politik Timor-Leste menjadi subyek perselisihan internasional selama 24 tahun, dan kekerasan tahun 1999 terjadi dalam konteks satu operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditujukan untuk penyelesaian perselisihan tersebut. Karena itu setiap pembahasan tentang pertanggungjawaban atas kekerasan tersebut harus mengkaji peran masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggotanya yang paling kuat.

Bab ini mengemukakan bahwa, terlepas dari bantuan mereka untuk mengakhiri kekerasan, anggota-anggota masyarakat internasional yang besar kekuatannya, melalui tindakan maupun kelalaian mereka, secara politik dan moral bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi pada 1999. Bab ini juga mengemukakan bahwa PBB memiliki tanggung jawab khusus untuk menjamin bahwa para pelaku kekerasan di Timor-Leste dihadapkan ke pengadilan. Bab ini menyimpulkan bahwa suatu mahkamah pengadilan pidana internasional untuk Timor-Leste harus didirikan pada kesempatan paling awal dan bahwa Dewan Keamanan serta Sekretaris Jenderal PBB harus memelopori tindakan ini.

* Dikutip dalam ABC, *Four Corners*, "The Vanishing," 18 Oktober 1999, transkrip, halaman 10.

Tanggung jawab internasional

Pejabat-pejabat Indonesia berusaha menyalahkan UNAMET untuk terjadinya kekerasan di Timor-Leste, khususnya dalam periode setelah pemungutan suara. Kritik biasanya berpusat pada tuduhan bahwa UNAMET bersikap berat sebelah dan curang dalam penyelenggaraan referendum. Bersaksi dalam pengadilan terhadap mantan Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur Kolonel Timbul Silaen, Jenderal Wiranto misalnya mengatakan: “Ketidaknetralan UNAMET pada saat yang bersejarah tersebut memancing kemarahan di kalangan rakyat Timor-Leste yang merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil...”[†] Tuduhan serupa juga dibuat oleh banyak pejabat militer dan pemerintah yang lain.[†]

Sebagian pejabat juga menuduh UNAMET bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan karena mengambil alih kendali keamanan di Timor-Leste dari TNI dan Polri. Pada September 2002, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim bersaksi di satu pengadilan Indonesia bahwa TNI tidak bisa memelihara keamanan karena “UNAMET harus diberitahu tentang semua pergerakan TNI.”[‡] Bersaksi di depan pengadilan terhadap mantan Gubernur Abilio Soares, Mayor Jenderal Adam Damiri mempersalahkan UNAMET bahkan dengan lebih langsung. Ia dilaporkan mengatakan kepada pengadilan:

“Menurut resolusi PBB, tanggung jawab keamanan sebelum, selama, dan setelah pemungutan suara berada di tangan Polisi Sipil PBB ... TNI telah ‘disingkirkan’ dari urusan ini.”[§]

Pernyataan ini sangat jelas salah. Kesepakatan 5 Mei dengan sangat jelas menyatakan bahwa tanggung jawab keamanan berada di tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sama halnya, pernyataan yang sering diulang-ulang mengenai UNAMET yang berat sebelah tidak pernah didukung dengan bukti. Sebenarnya, ketika pernyataan itu diajukan kepada Komisi Pemilihan Independen, badan tersebut menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar.

* Dikutip dalam “Jakarta Troops Faced ‘Mission Impossible’ in E. Timor: Wiranto,” *Jakarta Post*, 9 April 1999.

† Dalam Desember 1999, misalnya, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim mengatakan kepada para penyelidik Indonesia bahwa UNAMET telah memasok senjata kepada Falintil dan bahwa kecurangan UNAMET mengakibatkan kekerasan setelah pemungutan suara. Lihat “Persiapan Pemanggilan KPP HAM Timtim,” *Kompas* 9 Desember 1999. Pada 2000, Kolonel Noer Muis mengeluarkan ‘buku putih’ yang menyatakan bahwa kecurangan UNAMET yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Lihat “TNI ‘White Paper’ Tells of Referendum Fraud,” *Suara Timor Lorosae*, 10 Oktober 2000.

‡ Dikutip dalam *Suara Timor Lorosae*, 12 September 2002.

§ Dikutip dalam *Jakarta Post*, 13 Mei 2002. Dalam satu telegram kepada kantor pusat PBB di New York bertanggal 13 Mei 2002, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB di Timor Leste Sergio Vieira de Mello menyebut tuduhan Damiri sebagai “suatu penghinaan.” Pada kesempatan yang terpisah, Mayor Jenderal Damiri mengeluh bahwa “UNAMET yang membuat Jakarta mengganti komandan Kodim Suai Letnan Kolonel Achmad Mas Agus untuk alasan yang tidak jelas, sehingga saya menunjuk [Letnan Kolonel] Liliek [Koeshadianto] untuk mengisi kekosongan. UNAMET juga melarang militer untuk berpatroli.” Dikutip dalam *Jakarta Post*, 20 Juni 2002.

Namun, jika tuduhan tertentu dari Indonesia tentang tanggung jawab UNAMET dalam kekerasan 1999 tidak meyakinkan, tetap ada dasar untuk mengatakan bahwa masyarakat internasional juga mengemban tanggung jawab. Argumen utama dalam hal ini adalah bahwa anggota-anggota masyarakat internasional yang besar kekuatannya telah memudahkan terjadinya kekerasan, baik karena persetujuan diam-diam mereka yang sudah lama pada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Indonesia di Timor-Leste sejak 1975, maupun karena kegagalan mereka untuk mengambil langkah yang diperlukan dan mencukupi untuk menghentikan kekerasan 1999 yang telah banyak diperkirakan sebelumnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memang mengutuk invasi Indonesia pada 1975 melalui serangkaian resolusi. Tetapi selama 24 tahun pendudukan, tidak ada tindakan nyata yang dilakukan untuk memaksa Indonesia mundur dari Timor-Leste atau untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang luas oleh pasukan Indonesia dan kakitangannya. Sebaliknya negara-negara yang berada pada posisi paling kuat untuk melakukan sesuatu, seperti Amerika Serikat dan Australia, nyatanya memperlancar pendudukan dan kekerasan. Sampai dengan 1999, perilaku dari negara-negara kuat itu ditandai oleh perpaduan antara dukungan terbuka, tidak bertindak, dan bungkam, yang tujuan utamanya jelas untuk memelihara hubungan bersahabat dengan pemerintah Indonesia dan TNI.

Sikap negara-negara kuat tersebut semacam itu lebih daripada sekadar fakta sejarah yang patut disesali. Sikap itu membuat negara-negara tersebut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama pendudukan Indonesia. Hal yang sama bisa dikatakan mengenai tindakan sejumlah badan internasional, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), serta perusahaan-perusahaan yang telah menjual senjata kepada Indonesia. Setidaknya, negara-negara, badan-badan, dan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak turut menyumbang dalam pelaksanaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste. Pada umumnya mereka tidak berbuat demikian.

Persoalan persetujuan diam-diam dan keterlibatan masyarakat internasional dipertegas oleh posisi yang diambil oleh negara-negara penting mengenai masalah keamanan untuk Konsultasi Rakyat 1999. Walaupun kekerasan milisi meningkat awal 1999 dan ada perkiraan yang patut dipercaya bahwa keadaan akan semakin buruk, negara-negara yang paling berpengaruh tidak melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk memastikan adanya pengaturan keamanan yang efektif untuk referendum. Sebaliknya, Kesepakatan 5 Mei menunjuk aparat keamanan Indonesia sebagai pemegang tanggung jawab tunggal untuk memelihara hukum dan ketertiban. Bahkan pandangan yang sekilas pada sejarah angkatan bersenjata Indonesia dan perilaku mereka di Timor-Leste jelas menunjukkan betapa berbahayanya pendekatan ini.

Sebagian orang yang mengetahui perundingan-perundingan pada awal 1999 menyatakan bahwa dalam perundingan-perundingan tersebut diajukan usulan kuat tentang kehadiran pasukan PBB, tetapi semua ini dengan tegas ditolak oleh para pejabat Indonesia. Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Timor-Leste, Duta

Besar Jamsheed Marker, misalnya, menulis bahwa saran mengenai kehadiran pasukan PBB ditolak dengan tegas oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas pada satu pertemuan pada Maret 1999.^{*} Sama halnya, ketika Perdana Menteri Australia John Howard mengangkat kemungkinan pasukan penjaga perdamaian PBB pada satu pertemuan dengan Presiden Habibie akhir April 1999, Habibie dikatakan menjadi “meledak”, menolak samasekali penempatan pasukan asing di wilayah ‘Indonesia’.[†]

Namun ada alasan untuk meragukan bahwa persoalan pasukan penjaga perdamaian PBB diperdebatkan begitu sengit seperti yang telah diklaim oleh para peserta itu. Dalam satu jumpa pers di New York, April 1999, yang mengumumkannya telah dicapainya satu kesepakatan, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas mengatakan kepada para wartawan bahwa “dalam pembicaraan-pembicaraan kami, pasukan penjaga perdamaian PBB tidak diangkat sebagai masalah.”[‡] Dalam jumpa pers yang sama, Duta Besar Marker menjelaskan keputusan untuk tidak mendorong pengiriman pasukan penjaga perdamaian, dengan mengatakan: “Kami tidak menganggap perlu mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, menerjunkan sejumlah besar pasukan Helm Biru ke sana. Kami tidak menganggap bahwa keadaannya menuntut demikian.”[§]

Posisi lemah yang diambil selama perundingan tersebut jelas dipengaruhi oleh posisi sejumlah kecil negara kuat. Misalnya, Marker telah mencatat bahwa para perunding PBB menghadapi tekanan kuat dari pemerintah Amerika Serikat dan Australia agar tidak menekan terlalu keras pada masalah keamanan.[¶] Sama dengan itu, seorang pejabat PBB yang mengetahui perundingan-perundingan itu telah menulis tentang keengganan mendalam dari negara-negara penting untuk mendukung pengerahan suatu pasukan militer atau polisi internasional.” Hasilnya yang patut disesali adalah bahwa argumen untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak pernah dibuat secara sungguh-sungguh. Seperti yang diakui kemudian oleh seorang diplomat yang bertugas di Jakarta, selama berlangsungnya perundingan “setiap orang terlalu banyak menyerah.”^{††}

.....
^{*} Jamsheed Marker, *East Timor: a Memoir of the Negotiations for Independence*, Jefferson, N.C.: McFarland & Company, 2003, halaman 139.

[†] Ini merupakan keterangan Howard mengenai pertemuan itu, seperti yang dilaporkan dalam Greenlees dan Garran, *Deliverance*, halaman 145.

[‡] United Nations, Press Release SG/SM/6966, 23 April 1999.

[§] United Nations, Press Release SG/SM/6966, 23 April 1999.

[¶] Marker, *East Timor*, halaman 153-154. Patut dicatat bahwa sudah pada akhir Februari 1999, pejabat-pejabat tinggi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang sangat ingin menghindari membuat Pemerintah Indonesia merasa terkucil, masih tetap mencari alternatif-alternatif selain pemungutan suara langsung di Timor-Leste. Dalam keadaan itu, sulit dibayangkan bahwa para pejabat AS akan mendesak keras untuk pembentukan suatu pasukan penjaga perdamaian PBB.

^{**} Tamrat Samuel, “East Timor: The Path to Self-Determination,” dalam Chandra Lekha Sriram dan Karin Wermester (penyunting), *From Promise to Practice: Strengthening UN Capacities for the Prevention of Violent Conflict*, Boulder: Lynne Reiner, 2003, halaman 211-212 dan 225.

^{††} *Financial Times*, 7 September 1999.

Kegagalan untuk mendapatkan pengaturan keamanan yang memadai punya akibat langsung di Timor-Leste, di mana TNI dan milisi kakitangan mereka melanjutkan menyorot dan membunuh para pendukung kemerdekaan. Keadaan keamanan begitu buruk sehingga segera setelah mulai masuknya PBB pada Mei 1999, muncul pertanyaan mengenai apakah tepat jika pemungutan suara tetap dilakukan. Posisi UNAMET mengenai persoalan tersebut bukan merupakan satu kesimpulan yang pasti. Dalam serangkaian penilaian yang disusun pada Juni dan Juli, para analis UNAMET berpendapat bahwa tidak satupun kriteria keamanan yang disebutkan di dalam memorandum Sekretaris Jenderal PBB awal Mei sudah dipenuhi, dan karena itu referendum hendaknya tidak dilanjutkan.

Akhirnya posisi tersebut tidak bertahan. Namun adalah keliru untuk menyimpulkan bahwa keputusan PBB melanjutkan pemungutan suara itu ceroboh seperti yang dikatakan sebagian pengkritik. Keputusan PBB itu sebagian bertolak dari ketidakpastian keadaan di lapangan dan indikasi-indikasi bahwa kekerasan mungkin masih bisa dikendalikan. Para pejabat senior UNAMET berpandangan bahwa tekanan politik yang terus-menerus mungkin meyakinkan pihak berwenang Indonesia untuk menghentikan milisi dan membiarkan pemungutan suara berlanjut dengan hanya sedikit gangguan. Keputusan untuk melanjutkan juga didukung oleh pemimpin utama perlawanan Xanana Gusmão dan banyak orang Timor-Leste lainnya. Mereka menyebutkan bahwa penundaan hanya akan menguntungkan pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan—pihak yang sama yang tidak ingin menyaiksikan suatu pengungkapan bebas kehendak rakyat.

Namun, keputusan untuk terus maju sangat dipengaruhi oleh tekanan politik yang berasal dari PBB di New York dan dari ibukota berbagai negara kuat. Pada tingkat politik, posisi PBB dibatasi oleh kepentingan lima anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Posisi PBB juga diarahkan oleh lima negara yang secara khusus bersidang di New York untuk tujuan ini, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Jepang, yang secara informal dikenal sebagai Kelompok Inti (Core Group). Lima Anggota Tetap dan Kelompok Inti amat sangat ingin untuk maju dengan referendum dan enggan melakukan apapun yang mungkin bisa membuat pemerintah dan militer Indonesia gusar.^{*} Di samping itu juga ada tekanan terus-menerus dari pemerintah Indonesia. Dipahami bahwa setiap pernyataan maupun resolusi Dewan Keamanan yang tidak mendapatkan dukungan dari Indonesia akan ditolak oleh Cina dan Rusia; dan sebagai akibatnya prakarsa semacam itu umumnya dihindari.

Ketika menjadi jelas bahwa pemungutan suara akan dilanjutkan, sejumlah pengamat berpandangan bahwa harus diturunkan suatu pasukan penjaga perdamaian internasional bersenjata—dan bahwa hal ini harus terjadi sebelum hari pemungutan suara. Di antara mereka yang sampai pada kesimpulan tersebut adalah satu delegasi dari Kanada. Di akhir kunjungan mereka pada 12 Agustus 1999, jurubicara delegasi

.....
^{*} Negara-negara anggota Dewan Keamanan dan negara-negara utama “juga sangat berkeinginan untuk tidak memberikan kesan bahwa kegiatan kekerasan sedang mengancam menggagalkan proses.” Tamrat Samuel, “East Timor: Path to Self Determination,” halaman 213.

tersebut mengatakan: “Kecuali Indonesia memenuhi kewajibannya, kami yakin pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Timor-Leste sesegera mungkin sangat perlu dilakukan.” Satu delegasi Kongres Amerika Serikat membuat pernyataan yang sama tegasnya pada akhir Agustus 1999.

Namun, gagasan menempatkan pasukan penjaga perdamaian sebelum pemungutan suara tidak pernah beranjak dari itu. Alasannya sederhana: gagasan tersebut aktif ditentang oleh negara-negara utama di Dewan Keamanan, terutama Amerika Serikat. Seperti yang dicatat oleh harian *New York Times* awal September 1999, “... tidak ada negara utama di Dewan Keamanan yang mendesak pembentukan pasukan bersenjata penjaga perdamaian. Para diplomat mengatakan bahwa Amerika Serikat, khususnya, tetap menentang tindakan semacam itu.”[†] Ini tidak berarti bahwa Amerika Serikat dan negara-negara lainnya diam di tengah meningkatnya kekerasan. Ada banyak kritik yang dilontarkan. Pada Juni, misalnya, wakil panglima angkatan bersenjata Australia, Marsekal Udara Doug Riding, memberikan pesan yang sangat tegas kepada para pejabat tinggi TNI mengenai dukungan resmi TNI kepada milisi. Kritik lebih jauh disuarakan dalam pertemuan negara-negara donor untuk Indonesia di Paris pada akhir Juli dan sekali lagi disuarakan menjelang hari pemungutan suara akhir Agustus.[‡] Tetapi tidak pernah ada pembahasan yang sungguh-sungguh mengenai pasukan penjaga perdamaian. Sebaliknya, negara-negara utama dan Dewan Keamanan PBB sebagai satu lembaga, bersikukuh pada posisi bahwa keamanan adalah tanggung jawab pemerintah Indonesia.

Ketika staf PBB atau pengamat luar bertanya atau mendesak penempatan pasukan penjaga perdamaian, jawabannya adalah bahwa tidak mungkin menempatkan pasukan penjaga perdamaian tanpa persetujuan Indonesia, atau dengan menyebutkan Bab VII Piagam PBB.[§] Juga dikatakan, sejak sedini Juli bahwa diperlukan waktu yang terlalu lama—setidaknya tiga bulan—untuk memobilisasi pasukan semacam itu sehingga tidak ada gunanya membicarakan penempatan pada masa sebelum pemungutan suara.

Penting bahwa saat ketika Dewan Keamanan akhirnya memberikan dukungan mutlak bagi Pasukan Multi-Nasional (MNF – *Multi-National Force*) pimpinan Australia pada 15 September 1999, resolusinya (No. 1264) menyebutkan Bab VII dari Piagam PBB dan memberikan wewenang kepada MNF untuk menggunakan semua sarana yang diperlukan untuk memulihkan keamanan. Lebih lanjut,

.....
* Pembicara adalah anggota parlemen dari New Democratic Party, Svend Robinson. Dikutip dalam AFP, 12 Agustus 1999.

† *New York Times*, 6 September 1999.

‡ Untuk kritik dan ancaman pada pertemuan Paris, lihat AFP, 27 Juli 1999. Untuk ungkapan keprihatinan di akhir Agustus, lihat *Australian Financial Review*, 19 Agustus 1999.

§ Pasal 42 dari Bab VII Piagam PBB (1945) menyatakan bahwa jika tindakan-tindakan lain terbukti tidak memadai, Dewan Keamanan “bisa mengambil tindakan dengan kekuatan udara, laut, atau darat yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan kedamaian dan keamanan internasional.” Sebagian pembela hak asasi manusia pada waktu itu berpendapat bahwa resolusi Bab VII tidak diperlukan karena PBB tidak pernah mengakui kedaulatan Indonesia di Timor-Leste. Namun pendapat tersebut tampaknya tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam Dewan Keamanan.

terlepas dari pernyataan sebelumnya bahwa diperlukan waktu tiga bulan untuk penempatan pasukan, MNF telah ada di lapangan dalam waktu seminggu setelah resolusi Dewan Keamanan itu. Dengan kata lain, semua yang dikatakan mengenai ketidakmungkinan menempatkan pasukan penjaga perdamaian tidak sepenuhnya benar. Apa yang mencegahnya terjadi lebih cepat bukanlah suatu 'realitas politik' yang tidak dapat diubah dan bahkan juga bukan kesulitan logistik, tetapi lebih karena sangat kurangnya kemauan politik.'

Apapun alasannya, penentangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tetap dipertahankan Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya, setidaknya sampai 10 September—hampir dua minggu setelah milisi dan TNI mulai melancarkan kekerasannya pada 30 Agustus. Ini tidak berarti bahwa Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tidak melakukan apapun selama periode ini.[†] Presiden Clinton dua kali menulis surat kepada Presiden Habibie mengungkapkan keprihatinannya dan mendesak agar pemerintah Indonesia melakukan segala upaya untuk memulihkan keamanan. Pada 8 September, Panglima pasukan AS di Pasifik, Laksamana Dennis Blair, pergi ke Jakarta untuk menyampaikan pesan yang sama secara langsung kepada Jenderal Wiranto. Perdana Menteri Australia John Howard dan para perwira tinggi angkatan bersenjata Australia juga berulang kali berhubungan dengan rekan-rekan mereka di Jakarta.

Betapapun tidak lazim dan jujur, prakarsa-prakarsa yang dilakukan itu samasekali tidak cukup untuk mengubah keadaan lapangan di Timor-Leste. Dan begitulah, UNAMET tidak dapat berbuat apa-apa ketika kekerasan merebak. Tepat pada hari-hari itulah dan dalam masa dua pekan sebelum MNF disetujui dan dikerahkan, Timor-Leste dibakar rata dengan tanah, lebih daripada seribu orang dibunuh, dan kira-kira separuh penduduk Timor-Leste dipindahkan secara paksa.

Singkatnya, bisa dikemukakan pendapat yang kuat bahwa tanggung jawab politik dan moral, jika bukan tanggung jawab hukum untuk kekerasan 1999, sebagian ada pada masyarakat internasional dan khususnya pada beberapa negara anggota PBB yang paling kuat. Melalui tindakan dan pembiaran mereka, negara-negara penting secara efektif memperlancar invasi ke Timor-Leste dan, bersama badan-badan dan perusahaan-perusahaan internasional, memfasilitasi suatu pola historis pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor-Leste. Lebih langsung, karena gagal mengambil tindakan efektif untuk mencegah kekerasan yang sudah banyak diperkirakan pada 1999, anggota-anggota penting masyarakat internasional memperlancar kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Indonesia dan milisi.

.....
^{*} Tamrat Samuel, yang bertanggung jawab atas Timor-Leste dan Indonesia di dalam Departemen Politik PBB sejak 1992 hingga 2000, menulis bahwa "nyaris tidak ada keinginan dari negara-negara penting untuk mengerahkan suatu pasukan penjaga perdamaian." Samuel, "East Timor: The Path to Self Determination," halaman 211.

[†] Untuk pembahasan mengenai tanggapan internasional terhadap krisis di awal September, lihat Greenlees dan Garran, *Deliverance*, Bab 12. Lihat juga, Geoffrey Robinson, "If You Leave Us Here, We Will Die," dalam Nicolaus Mills dan Kira Brunner (penyunting), *The New Killing Fields: Massacre and the Politics of Intervention*, New York: Basic Books, halaman 159-183.

Dukungan untuk pandangan ini, secara paradoks, justru terletak pada efektivitas tindakan-tindakan yang akhirnya diambil oleh negara-negara dan badan-badan yang sama pada pertengahan September 1999. Menanggapi kemarahan publik yang semakin meningkat, Amerika Serikat dan pemerintah negara-negara penting lainnya, serta Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, akhirnya melakukan tindakan menekan Tentara Nasional Indonesia dan milisi kakitangan mereka. Untuk pertama kalinya dalam waktu 24 tahun, pihak-pihak ini memberikan tekanan yang sungguh-sungguh dan bersama-sama terhadap pemerintah Indonesia dengan memutuskan hubungan militer dan mengancam menghentikan bantuan ekonomi. Prakarsa ini terjadi bersamaan dengan kunjungan yang tidak biasa dari satu delegasi Dewan Keamanan PBB ke Jakarta dan Dili, yang mendesak pemerintah Indonesia untuk menerima intervensi internasional. Di bawah tekanan yang besarnya belum pernah terjadi sebelumnya ini, pada 12 September pemerintah Indonesia sepakat mengizinkan penempatan pasukan bersenjata internasional. Pasukan tersebut mendarat sekitar seminggu kemudian dan setelah bertugas selama beberapa minggu kekerasan yang paling buruk sudah dihentikan.

Tanggung jawab PBB: Masalah keadilan

Jika anggota-anggota masyarakat internasional memikul tanggung jawab, karena bungkam dan tidak bertindak, atas kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai satu lembaga menanggung satu beban tambahan: tanggung jawab untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak akan lepas dari penghukuman.

Tentu saja memastikan bahwa para pelaku kejahatan terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional dihadapkan ke pengadilan merupakan perhatian umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi dalam kasus Timor-Leste tahun 1999, prinsip umum tersebut berlaku dengan kekuatan khusus, karena tiga alasan. *Pertama*, kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada 1999 terjadi dalam konteks suatu proses yang dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mandat yang jelas dari Dewan Keamanan.^{*} *Kedua*, kejahatan tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan dan Kesepakatan 5 Mei antara Indonesia, Portugal, dan PBB.[†] *Ketiga*, resolusi-resolusi yang diadopsi Dewan Keamanan dan Komisi Hak Asasi Manusia sejak September 1999 secara tersurat mempercayakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membawa para pelaku kejahatan tersebut ke hadapan pengadilan.[‡] Beberapa tahun telah berlalu sejak

* PBB juga memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan Piagam PBB, sehubungan dengan peran sentralnya dalam proses dekolonisasi Timor-Leste.

† Lebih jauh, berdasarkan Kesepakatan 5 Mei, PBB secara efektif menjadi otoritas yang memerintah di Timor-Leste setelah pemungutan suara. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa PBB memiliki kewajiban hukum yang sama dengan kewajiban suatu negara untuk menghadapkan ke pengadilan para pelaku kejahatan terhadap umat manusia.

‡ Resolusi Dewan Keamanan No. 1272 (25 Oktober 1999) menyebutkan dengan jelas bahwa Dewan

komitmen-komitmen itu dibuat, tetapi para pelaku utama kejahatan tersebut masih terus bebas berkeliaran.

Tanggung jawab khusus PBB ditegaskan oleh Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor-Leste, satu badan yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal pada November 1999.⁷ Dalam laporannya, Komisi ini menegaskan bahwa:

“Tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di Timor-Leste diarahkan untuk melawan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam, dan bertentangan dengan kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan tersebut. Berdasarkan Pasal 25 Piagam, Negara-Negara Anggota setuju menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan. Perlawanan terorganisasi di Timor-Leste terhadap keputusan Dewan Keamanan menuntut perhatian dan tanggapan internasional tertentu. Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai satu organisasi, berkepentingan untuk ambil bagian dalam seluruh proses penyelidikan, penetapan pertanggungjawaban, dan penghukuman mereka yang bertanggung jawab, dan dalam memajukan rekonsiliasi.”[†]

Perlu dikemukakan bahwa pandangan Komisi ini didukung oleh Sekretaris Jenderal Kofi Annan. Lebih lanjut Sekretaris Jenderal menegaskan tekadnya untuk bekerjasama dan memantau kemajuan dalam urusan ini. Dalam suratnya pada Januari 2000 kepada Ketua Dewan Keamanan dan lain-lain, yang mengantarkan laporan Komisi tersebut, Annan menulis:

.....
“mengutuk semua kekerasan dan tindakan yang mendukung kekerasan di Timor-Leste... dan menuntut agar semua yang bertanggung jawab dihadapkan ke pengadilan.” Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB 1999/S-4/1 tanggal 27 September 1999 menegaskan bahwa masyarakat internasional akan mengerahkan semua usaha untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste akan dihadapkan ke pengadilan.

* Komisi ini dibentuk sesuai dengan Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB 1999/S-4/1 tanggal 27 September 1999, yang disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam keputusannya 1999/293 tanggal 15 November 1999. Komisi diberi mandat untuk “mengumpulkan dan menyusun secara sistematis keterangan tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan-tindakan yang mungkin merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di Timor Timur sejak Januari 1999.”

† United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, “Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary-General,” Januari 2000, paragraf 146-147.

“Seperti ditunjukkan laporan ini, tindakan-tindakan melanggar hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional diarahkan untuk melawan keputusan Dewan Keamanan dan bertentangan dengan kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjalankan keputusan Dewan Keamanan. Fakta ini menegaskan perlunya membuat para pelaku bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka ... Saya ingin meyakinkan Negara-Negara Anggota mengenai tekad kuat saya untuk bekerjasama dengan proses-proses antarpemerintah dalam urusan penting ini. Saya akan memantau dari dekat kemajuan untuk mencapai tanggapan yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.”

Mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk melaksanakan komitmen ini, Komisi Penyelidik sangat jelas. Komisi ini merekomendasikan agar Dewan Keamanan PBB membentuk suatu pengadilan pidana internasional, sama dengan yang pernah dibentuk untuk Rwanda dan bekas Yugoslavia. Secara khusus Komisi Penyelidik merekomendasikan bahwa:

“Perserikatan Bangsa-Bangsa harus membentuk suatu pengadilan pidana internasional yang terdiri atas hakim-hakim yang ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebaiknya dengan partisipasi anggota dari Timor-Leste dan Indonesia. Pengadilan akan bertempat di Indonesia, Timor-Leste, dan wilayah lain yang relevan untuk menerima pengaduan dan mengadili serta menghukum mereka yang didakwa oleh badan penyelidik independen melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia fundamental dan hukum humaniter internasional yang terjadi di Timor-Leste sejak Januari 1999 tanpa memandang kebangsaan individu yang bersangkutan atau di mana orang-orang itu berada ketika pelanggaran dilakukan.”[†]

Tiga Pelapor Khusus PBB yang melakukan penyelidikan di Timor-Leste akhir 1999 membuat rekomendasi yang pada dasarnya sama.[‡] Dalam laporan mereka pada

.....
* United Nations, Secretary-General, Identical Letters to the President of the General Assembly, the President of Security Council and the Chairperson of the Commission on Human Rights, (UN. A/54/726,S/2000/59), 31 Januari 2000. Surat pengantar untuk laporan: United Nations, Office of the High Commissioner or Human Rights, “Report of the International Commission of Inquiry on East Timor To the Secretary General,” Januari 2000.

† United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, “Report of the International Commission of Inquiry on East Timor to the Secretary General,” Januari 2000, paragraf 153.

‡ Berdasarkan Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB 1999/S-4/1 tanggal 27 September 1999, tiga Pelapor Khusus PBB menyelenggarakan satu misi bersama ke Timor-Leste pada November 1999. Ketiganya adalah: Pelapor Khusus untuk pembunuhan di luar hukum, seketika, atau sewenang-wenang; Pelapor Khusus untuk persoalan penyiksaan; dan Pelapor Khusus untuk kekerasan terhadap perempuan, sebab-sebab, dan konsekuensinya. Laporan mereka, *Situation of Human Rights in East Timor* (UN No. A/54/660) dikeluarkan pada 10 Desember 1999.

Desember 1999, mereka berpendapat bahwa, sesuai dengan norma-norma hukum internasional yang sudah diterima, tanggung jawab utama untuk menyelidiki kejahatan di Timor-Leste dan membawa para pelaku kejahatan ke pengadilan berada di tangan Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan itu mereka berpendapat bahwa pihak berwenang Indonesia harus diberi kesempatan melakukan penyelidikan dan penuntutan sebelum tindakan yang lebih jauh dipertimbangkan. Namun, mereka mengemukakan bahwa jika pihak berwenang Indonesia gagal membuat kemajuan yang memuaskan di dalam kerja tersebut, akan menjadi pantas untuk membentuk suatu pengadilan pidana internasional. Lebih khusus, para Pelapor Khusus PBB tersebut merekomendasikan bahwa:

“Kecuali dalam waktu beberapa bulan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelidiki keterlibatan TNI dalam tindak kekerasan tahun lalu memberikan hasil, dalam hal memberikan penjelasan yang bisa dipercaya dan menghadapkan ke pengadilan para pelakunya—baik pelaku langsung maupun yang memegang tanggung jawab komando—Dewan Keamanan harus mempertimbangkan pembentukan suatu pengadilan pidana internasional untuk keperluan tersebut. Ini sebaiknya dilakukan dengan persetujuan Pemerintah Indonesia, tetapi persetujuan seperti itu tidak bisa dijadikan syarat. Pengadilan tersebut harus memiliki yurisdiksi atas semua kejahatan menurut hukum internasional yang dilakukan oleh pihak manapun di dalam Wilayah [Timor-Leste] sejak kepergian Kekuasaan kolonial [Portugal].”

Para Pelapor Khusus memperjelas bahwa keperluan membentuk pengadilan pidana internasional bergantung pada memadai tidaknya langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak berwenang nasional Indonesia. Karena itu cukup adil untuk menanyakan: apa kemajuan yang telah dibuat dalam waktu bertahun-tahun setelah disampaikannya rekomendasi tersebut. Jawaban sederhananya adalah: sangat sedikit.

Terutama untuk menanggapi tuntutan pembentukan pengadilan internasional, pada 2001 pemerintah Indonesia membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc untuk mengadili kasus-kasus yang muncul dari kejadian kekerasan di Timor-Leste.[†] Setelah keterlambatan yang cukup lama, pada Januari 2002 akhirnya dikeluarkan surat dakwaan terhadap 18 orang untuk kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada 1999. Terdakwa meliputi sejumlah perwira tinggi TNI dan Polri, termasuk Mayor Jenderal Adam Damiri, Brigadir Jenderal Noer Muis, dan Kolonel (Pol.) Timbul Silaen. Dari 18 orang yang diadili, dua belas orang diputus bebas dalam pengadilan tingkat pertama, dan empat orang lagi diputus bebas di tingkat banding. Dua orang yang dinyatakan terbukti bersalah adalah mantan Gubernur

.....
* UN, *Situation of Human Rights in East Timor* (UN NO. A/54/660), 10 Desember 1999, halaman 14.

† Pengadilan tersebut didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 96/2001.

Timor Timur, Abílio Osório Soares, dan pemimpin milisi Eurico Guterres, yang keduanya adalah orang Timor-Leste. Tidak ada perwira atau pejabat Indonesia yang dipenjarakan, dan sebagian dari mereka justru dipromosikan dan diangkat ke jabatan komando yang sangat penting.*

Laporan ini bukanlah tempat untuk sebuah analisis yang tuntas mengenai sidang-sidang tersebut atau mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang menyelenggarakannya.† Namun, beberapa butir umum dapat dibuat untuk menilai efektivitasnya dalam memperjelas fakta dan menghadapkan para pelaku pelanggaran ke pengadilan.

Pertama, ada masalah fatal dengan mandat pengadilan ini. Yang paling mencolok, keputusan Presiden yang menjadi dasar pembentukan pengadilan ini membatasi yurisdiksi pengadilan pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya dalam dua bulan pada 1999 (April dan September), dan hanya di tiga kabupaten dari tiga belas kabupaten di Timor-Leste (Dili, Liquiçá, dan Covalima). Keputusan tersebut secara efektif membuat kebanyakan kejahatan tidak akan pernah diselidiki atau diadili, dan bahwa sifat luas dan sistematis dari kejahatan-kejahatan tersebut tidak akan dibuktikan.

Kedua, Kejaksaan Agung memutuskan hanya menuntut empat kasus dan dengan demikian membatasi kemungkinan membuktikan bahwa kekerasan tersebut berlangsung luas dan sistematis. Lebih lanjut, para tersangka utama—mencakup banyak perwira tinggi yang disebutkan dalam laporan ini dan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia sendiri—tidak masuk dalam jajaran terdakwa. Nama-nama yang paling mencolok tidak dicantumkan adalah Jenderal Wiranto, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim, dan Mayor Jenderal Kiki Syahnakri.

Ketiga, dakwaan disiapkan dengan buruk dan dengan argumentasi yang lemah. Umumnya para jaksa penuntut gagal memanfaatkan bukti dokumenter dan kesaksian yang berlimpah yang ada pada mereka. Kebanyakan juga terlihat enggan mengajukan kasus mereka dengan kuat, terutama terhadap perwira-perwira tinggi TNI. Permintaan jaksa untuk membebaskan Mayor Jenderal Adam Damiri pada pertengahan 2003 memperlihatkan masalah ini.‡ Lebih lanjut, dalam beberapa kasus para hakim tampak lebih pandai dan bersemangat daripada para jaksa penuntut di dalam mengungkapkan bukti yang memberatkan tertuduh.

Terakhir, pelaksanaan sidang pengadilan dan tanggapan dari pejabat pemerintah serta kehakiman menunjukkan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dibentuk dan sidang-sidangnya dijalankan terutama untuk mengelakkan tuntutan

* Misalnya, pada saat diajukan ke pengadilan pada 2002, Mayor Jenderal Adam Damiri telah menduduki jabatan yang besar kekuasaannya, Asisten Operasi Kepala Staf Umum TNI. Dalam kedudukan itu, ia berperan sentral dalam penyelenggaraan operasi militer TNI di Aceh yang dimulai pada Mei 2003.

† Untuk analisis yang terperinci tentang sidang-sidang tersebut, lihat David Cohen, *Intended to Fail: Trials Before The Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*, New York: International Center for Transitional Justice, 2003.

‡ Lihat "Indonesia Wants to Acquit General in Human Rights Case," *New York Times*, 8 Juni 2003.

pembentukan pengadilan pidana internasional, bukan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan.

Karena alasan-alasan tersebut dan alasan-alasan lain, organisasi-organisasi hak asasi manusia terkemuka seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menyebut proses itu secara mendasar lemah dan merupakan ejekan kepada keadilan. Pada awal 2003, misalnya, Amnesty International menulis bahwa: "Proses di Indonesia sangat terbatas lingkungannya dan, walaupun ada hukuman terhadap beberapa orang, pada dasarnya gagal mencapai tujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan."^{*} Organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga hak asasi manusia yang bisa dipercaya di Indonesia maupun di Timor-Leste telah mencapai kesimpulan yang amat mirip.[†] Demikian juga dengan kelompok-kelompok keagamaan. Pada Mei 2003, satu kelompok yang terdiri atas 92 pemimpin dan organisasi keagamaan dari seluruh Amerika Serikat mengeluarkan satu pernyataan mengancam pengadilan Indonesia dan menyerukan pembentukan suatu pengadilan internasional.[‡]

Terlepas dari kepentingan mereka memelihara hubungan baik dengan Indonesia, pemerintah negara-negara penting juga bersikap kritis terhadap proses pengadilan di Indonesia. Misalnya, pada akhir 2002 Departemen Luar Negeri AS menyatakan kecewa dengan pembebasan para terdakwa yang baru saja dilakukan oleh pengadilan dan mengemukakan bahwa para penuntut "terus-menerus gagal menggunakan sumberdaya dan bukti yang tersedia pada mereka dari PBB dan lainnya dalam mendokumentasikan kekejaman-kekejaman di Timor-Leste."[§] Senada dengan itu, pada Juni 2003 Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengungkapkan keprihatinannya atas permintaan jaksa penuntut untuk membebaskan Mayor Jenderal Adam Damiri. "Sementara tidak memberikan penilaian sebelum putusan akhir dicapai," katanya, "kami mendapati sungguh mengecewakan bahwa justru jaksa penuntut yang mengusahakan putusan tidak bersalah dalam kasus ini."[¶]

Singkatnya, cukup adil untuk menyimpulkan bahwa proses hukum nasional Indonesia tidak membawa hasil, baik dalam hal mengungkapkan fakta secara bisa dipercaya maupun dalam menghadapkan para pelaku ke pengadilan.

^{*} Amnesty International, *Indonesia & Timor Leste: International Responsibility for Justice*, AI Doc. ASA 03/001/2003, London, April 2003, halaman 1. Dokumen ini juga berisi ringkasan yang berguna mengenai keprihatinan utama Amnesty Internasional terhadap proses pengadilan tersebut.

[†] Aliansi Nasional untuk Pengadilan Internasional, satu koalisi dari sekitar 20 organisasi non-pemerintah di Timor Leste, menyebut pengadilan itu sebagai "sandiwara yang memalukan." Surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, 13 Maret 2003.

[‡] Lihat, "An International Tribunal Must Be Established for East Timor: A Statement from U.S. Religious Leaders and Organizations," tersedia pada situs jaringan East Timor Action Network (ETAN): www.etan.org/action/action2/relig.htm

[§] Dikutip dalam "Lt. Col. Endar Priyanto", *Masters of Terror*, <http://yayasanhak.minihub.org/mot/bookto.htm>

[¶] Duta Besar Amerika Serikat Ralph L. Boyce, dikutip dalam "Indonesia Wants to Acquit General in Human Rights Case," *New York Times*, 8 Juni 2003.

Bagaimana dengan proses hukum di Timor-Leste sendiri? Di sini beritanya sedikit lebih baik, namun samasekali tidak cukup baik. Pada sisi positifnya, beberapa perangkat dasar peradilan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan berat, termasuk kejahatan terhadap umat manusia, sekarang ada di Timor-Leste. Pada 2000, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272 (1999), UNTAET telah memberlakukan statuta membentuk Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili untuk mengadili kejahatan berat, termasuk kejahatan terhadap umat manusia.^{*} Berdasarkan statuta ini, norma-norma hukum internasional diadopsi sebagai landasan untuk menuntut dan mengadili kejahatan-kejahatan semacam itu. UNTAET juga membentuk satu Unit Kejahatan Berat (Serious Crimes Unit – SCU) dengan wewenang menyelidiki kejahatan-kejahatan berat yang terjadi antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999 dan menuntut semua yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan tersebut.[†]

Setelah serangkaian permulaan yang salah dan keterlambatan, pada 2002 mekanisme ini mulai membuahkan hasil yang penting. Sampai akhir Mei 2003, 60 surat dakwaan telah dibuat terhadap 247 individu, yang sebagian besar dituntut atas kejahatan terhadap umat manusia.[‡] Dakwaan itu mencakup sekitar 40% dari seluruh pembunuhan yang dilaporkan terjadi selama 1999. Khususnya, mereka yang dituntut sampai Mei 2003 mencakup banyak perwira tinggi TNI yang diidentifikasi sebagai tersangka dalam laporan ini, termasuk Jenderal Wiranto dan tujuh perwira dan pejabat tinggi lainnya.

Hasil ini mengesankan, apalagi dicapai di tengah hambatan logistik dan politik yang besar. Namun, sedikit saja alasan untuk optimistis. Paling jelas, sampai akhir Mei 2003 lebih daripada 65% dari orang yang didakwa berada dengan bebas di Indonesia.[§] Dan nyaris tidak ada kemungkinan bahwa pejabat dan perwira tinggi yang telah didakwa—yaitu para manajer dan perencana kekerasan—akan pernah diadili melalui proses hukum di Timor-Leste. Alasan utamanya karena Pemerintah Indonesia samasekali menolak mengekstradisi para tersangka ke Timor-Leste atau mengakui kompetensi pengadilan Timor Leste untuk mengadili mereka.[¶] Akibatnya, kasus-kasus yang telah diadili sampai sekarang atau yang mungkin diadili di masa depan hanyalah kasus-kasus yang pelakunya milisi lokal.

* Statuta itu adalah Regulasi UNTAET No. 15/2000 (6 Juni 2000) "On the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction Over Serious Criminal Offences." Kejahatan berat yang menjadi yurisdiksi panel tersebut adalah: genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap umat manusia, pembunuhan, penyerangan seksual, dan penyiksaan.

† Setelah kemerdekaan Timor Leste pada 20 Mei 2002, Unit Kejahatan Berat beroperasi di bawah otoritas hukum Kejaksaan Agung Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Lihat Serious Crimes Unit (SCU), "Serious Crimes Update V/03," 28 Mei 2003.

‡ SCU, "Serious Crimes Update V/03," Dili, 28 Mei 2003.

§ Angkanya adalah 169 dari 247 terdakwa. Lihat SCU, "Serious Crime Update V/03," Dili, 28 Mei 2003.

¶ Menanggapi Surat Dakwaan Jenderal Wiranto dan lain-lain, yang dikeluarkan pada Februari 2003, Menteri Luar Negeri Indonesia dikutip mengatakan: "[Pengadilan Timor Leste] samasekali bukan pengadilan internasional... mereka tidak memiliki yurisdiksi internasional dan oleh karena itu secara hukum mereka tidak memiliki wewenang untuk menangkap orang-orang bukan Timor Timur." ABC Radio, 25 Februari 2003.

Masalah lain yang berkaitan adalah bahwa Pemerintah Timor-Leste enggan mengambil tanggung jawab mengadili pejabat tinggi Indonesia.⁷ Keengganan itu bisa dipahami. Sebagai negara kecil yang baru lahir, yang dimiskinkan dan dihancurkan oleh perang dan pendudukan dalam waktu yang lama serta memiliki perbatasan yang masih rentan dengan Indonesia, Timor Leste tidak dapat diharapkan memimpin proses yang mahal dan kompleks untuk menghadapi sejumlah pejabat paling berkuasa di Indonesia ke pengadilan. Lagi pula, walaupun pemerintah berniat mengambil tugas ini, mereka akan sangat terhalangi oleh kekurangan sumberdaya, kapasitas, dan keahlian di dalam badan peradilan baru negeri itu.⁸

Keadaan semakin buruk karena sekarang ada ketidakpastian tentang masa depan Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat yang mandatnya dari PBB, dua lembaga yang melaksanakan tugas mendasar penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan.⁹ Sampai saat ini pekerjaan mereka sangat bergantung pada staf PBB serta dana PBB dan internasional. Ketika bantuan menurun dan seiring dengan habisnya mandat UNMISSET pada Mei 2005, kemajuan di semua bidang ini dapat diperkirakan melambat dan bahkan mungkin akan berhenti.¹⁰

Dalam keadaan seperti ini, sangat tidak mungkin bahwa sistem peradilan Timor Leste, betapapun baiknya, akan memberikan hasil yang memuaskan dalam pencarian keadilan atas kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi pada 1999. Dengan kegagalan nyata proses pengadilan Indonesia sendiri, berarti semua jalan pengadilan nasional yang tersedia untuk mengadili para pelaku pelanggaran sekarang sudah habis ditempuh. Ini adalah keadaan yang tepat dan mutlak untuk menuntut kejahatan semacam itu di bawah yurisdiksi universal yang lebih luas. Lebih-lebih, itulah tindakan yang diusulkan oleh para Pelapor Khusus PBB dan Komisi Penyelidik Internasional mengenai Timor Leste hampir empat tahun lalu.

Karena alasan-alasan tersebut, laporan ini menyimpulkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa harus membentuk—sesungguhnya memiliki tugas mulia untuk membentuk—suatu pengadilan pidana internasional untuk mengadili kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi di Timor-Leste. Lebih khusus, laporan ini mendesak Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan PBB untuk memimpin dalam penanganan masalah ini, sesuai dengan komitmen yang mereka nyatakan untuk memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan.

* Presiden Xanana Gusmão khususnya sangat hati-hati dalam hal ini. Perdana Menteri Mari Alkatiri telah meminta pembentukan sebuah pengadilan internasional di negara ketiga yang netral. Lihat, "East Timor PM Wants International Tribunal To Try Indonesian Officers," AP, 30 Mei 2003.

† Untuk ringkasan yang berguna tentang masalah yang dihadapi badan peradilan Timor-Leste pada 2003, lihat Judicial System Monitoring Programme (JSMP), "JSMP Background Paper on the Justice Sector," dipersiapkan untuk The Timor-Leste and Development Partners Meeting, Juni 2003. Lihat juga UNMISSET, Press Release, "Justice Sector Consultation Meeting Ends: 'Fair and efficient justice key to a democratic state,'" Dili, 6 Juni 2003.

‡ Pada waktu laporan ini ditulis, SCU diperkirakan menyelesaikan penyelidikannya dalam November 2004 dan Panel Khusus menyelesaikan persidangan dalam Mei 2005.

§ Masalah-masalah ini dibahas secara lebih terperinci dalam Amnesty International, *Indonesia & Timor Leste: International Responsibility for Justice*, AI Doc. ASA03/001/2003, London, April 2003, halaman 8.

Tabel 1: Perwira dan pejabat senior yang diduga mengemban tanggung jawab individual dan komando untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste, 1999

| Militer | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Markas Besar TNI dan Angkatan Darat | | |
| 1 | Jenderal Wiranto | Panglima Tentara Nasional Indonesia & Menteri Pertahanan dan Keamanan |
| 2 | Jenderal Subagyo Hadisiswoyo | Kepala Staf Angkatan Darat |
| 3 | *Mayor Jenderal Kiki Syahnakri | Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat & Penguasa Darurat Militer, Timor Timur |
| 4 | Letnan Jenderal Sugiono | Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia |
| 5 | *Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin | Asisten Teritorial Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia |
| 6 | Mayor Jenderal Endriartono Sutarto | Asisten Operasi Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia |
| 7 | Letnan Jenderal Djamari Chaniago | Panglima Kostrad |
| 8 | Mayor Jenderal Syahrir | Komandan Jenderal Kopassus |
| 9 | Letnan Jenderal Tyasno Sudarto | Kepala BAIS (sebelum April 1999, BIA) |
| 10 | *Brigadir Jenderal Arifuddin | Direktur A, BAIS (sebelum April 1999, BIA) |
| 11 | *Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim | Kepala BIA (sampai Januari 1999) & Anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur |
| Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana | | |
| 1 | *Mayor Jenderal Adam Damiri | Panglima Kodam IX/Udayana |
| 2 | *Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon | Kepala Staf Kodam IX/Udayana |
| Komando Resor Militer (Korem) 164/WD | | |
| 1 | *Kolonel Tono Suratman | Komandan Korem 164/WD (sampai 13 Agustus 1999) |
| 2 | *Kolonel Noer Muis | Komandan Korem 164/WD (mulai 13 Agustus 1999) |
| 3 | Kolonel Mudjiono | Wakil Komandan Korem 164/WD (sampai Mei/Juni 1999) |
| 4 | Letnan Kolonel Supadi | Kepala Staf Korem 164/WD |
| 5 | Mayor R.M. Bambang Wisnumurty | Kepala Seksi Intelijen Korem 164/WD |
| Komando Distrik Militer (Kodim) 1627-1639 | | |
| 1 | Mayor Maman Rahman | Komandan Kodim 1632/Aileu |
| 2 | *Letnan Kolonel Paulus Gatot Rudianto | Komandan Kodim 1633/Ainaro |
| 3 | Letnan Kolonel Hisar Richard Hutajulu | Komandan Kodim 1628/Baucau |
| 4 | *Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian | Komandan Kodim 1636/Bobonaro |
| 5 | *Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus | Komandan Kodim 1635/Covalima |
| 6 | *Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto | Komandan Kodim 1635/Covalima (mulai 29 Agustus sampai 7 September 1999) |
| 7 | *Letnan Kolonel Endar Priyanto | Komandan Kodim 1627/Dili (sampai 9 Agustus 1999) |

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| 8 | *Letnan Kolonel Soedjarwo | Komandan Kodim 1627/Dili (mulai 9 Agustus 1999) |
| 9 | *Letnan Kolonel Muhamad Nur | Komandan Kodim 1637/Ermera |
| 10 | *Letnan Kolonel Sudrajat A.S. | Komandan Kodim 1629/Lautém |
| 11 | *Letnan Kolonel Asep Kuswadi | Komandan Kodim 1638/Liquiçá |
| 12 | *Letnan Kolonel Sulastiyo | Komandan Kodim 1631/Manatuto |
| 13 | Letnan Kolonel Gerson Ponto | Komandan Kodim 1631/Manatuto |
| 14 | Mayor Drs. H.M. Sinaga | Komandan Kodim 1634/Manufahi |
| 15 | *Letnan Kolonel Kamiso Miran | Komandan Kodim 1639/Oecussi |
| 16 | *Letnan Kolonel Bambang Sungesti | Komandan Kodim 1639/Oecussi |
| 17 | Letnan Kolonel Djoko Sukarsono | Komandan Kodim 1630/Viqueque (sampai sekitar Agustus 1999) |
| 18 | Letnan Kolonel Gustaf Hero | Komandan Kodim 1630/Viqueque (mulai sekitar Agustus 1999) |

Kopassus dan Komando Sektor

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | *Letnan Kolonel Yayat Sudrajat | Komandan Satgas Tribuana VIII (Kopassus) |
| 2 | *Kolonel Sunarko | Komandan Sektor A (sampai 21 Juni 1999) |
| 3 | *Kolonel Irwan Kusnadi | Komandan Sektor A (mulai 21 Juni 1999) |
| 4 | *Kolonel Tatang Zaenuddin | Komandan Sektor B (sampai 21 Juli 1999) |
| 5 | *Letnan Kolonel Nyus Rahasia | Wakil Komandan Sektor B |
| 6 | *Kolonel Gerhan Lantara | Komandan Darurat Militer Sektor A (September 1999) |

Batalion Tempur

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | *Letnan Kolonel Yakraman Yagus | Komandan Batalion Infanteri 744 |
| 2 | *Mayor Jacob Sarosa | Komandan Batalion Infanteri 745 |
| 3 | Komandan | Komandan Batalion Infanteri 143 |
| 4 | Komandan | Komandan Batalion Infanteri 301 |
| 5 | Komandan | Komandan Batalion Infanteri 406 |
| 6 | Komandan | Komandan Batalion Infanteri 621 |

Polri

Nasional (Polri) dan Daerah (Polda)

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Jenderal (Pol.) Roesmanhadi | Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| 2 | *Kolonel (Pol.) Timbul Silaen | Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur |

Distrik (Polres)

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| 1 | Letnan Kolonel (Pol.) Bambang Hermanu | Kepala Kepolisian Resor Aileu |
| 2 | *Mayor (Pol.) Drs. Rizali, SH | Kepala Kepolisian Resor Ainaro |
| 3 | Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Sodak C. Marpaung | Kepala Kepolisian Resor Baucau |
| 4 | *Mayor (Pol.) Drs. Budi Susilo | Kepala Kepolisian Resor Bobonaro |

| | | |
|----|---|----------------------------------|
| 5 | *Letnan Kolonel (Pol.) Gatot Subiaktoro | Kepala Kepolisian Resor Covalima |
| 6 | *Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Hulman Gultom | Kepala Kepolisian Resor Dili |
| 7 | Letnan Kolonel (Pol.) Ery T.B. Gultom | Kepala Kepolisian Resor Ermera |
| 8 | Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Irsan Wijaya | Kepala Kepolisian Resor Lautém |
| 9 | *Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova | Kepala Kepolisian Resor Liquiçá |
| 10 | Mayor (Pol.) Drs. Joko Irianto | Kepala Kepolisian Resor Liquiçá |
| 11 | Letnan Kolonel (Pol.) Drs. J. A. Sumampow | Kepala Kepolisian Resor Manatuto |
| 12 | Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rachim | Kepala Kepolisian Resor Manufahi |
| 13 | *Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Wilmar Marpaung | Kepala Kepolisian Resor Oecussi |
| 14 | Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rahman | Kepala Kepolisian Resor Viqueque |

Pejabat sipil

Nasional dan Provinsi

| | | |
|---|--|---|
| 1 | *Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan |
| 2 | *Letnan Jenderal (Purn.) A. M. Hendropriyono | Menteri Transmigrasi dan Pemukiman |
| 3 | *Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah | Menteri Penerangan |
| 4 | *Abílio Osório Soares | Gubernur Timor Timur |

Kabupaten

| | | |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1 | *Kolonel (Purn.) Suprpto Tarman | Bupati Aileu |
| 2 | *Evaristo Doutel Sarmiento | Bupati Ainaro |
| 3 | Virgílio Marçal | Bupati Baucau |
| 4 | *Guilherme dos Santos | Bupati Bobonaro |
| 5 | *Kolonel Herman Sedyono | Bupati Covalima |
| 6 | *Domingos M.D. Soares | Bupati Dili |
| 7 | Constantino Soares | Bupati Ermera |
| 8 | *Edmundo da Conceição Silva | Bupati Lautém |
| 9 | *Leoneto Martins | Bupati Liquiçá |
| 10 | *Vidal Doutel Sarmiento | Bupati Manatuto |
| 11 | Nazario José Tilman de Andrade | Bupati Manufahi |
| 12 | *Filomeno Misquito da Costa | Bupati Oecussi |
| 13 | *Martino Fernandes | Bupati Viqueque |

Nama-nama yang diberi tanda asterisk (*) adalah mereka yang diduga mengemban tanggung jawab individual dan komando.

Tabel 2: Perwira dan pejabat penting pada 1999 (berdasarkan urutan abjad)

| Perwira Militer (Nasional) | | |
|---|---|--|
| 1 | Brigadir Jenderal Arifuddin | Direktur A, BAIS (sebelum April 1999, BIA) |
| 2 | Letnan Jenderal Djamari Chaniago | Panglima Kostrad (Pangkostrad) |
| 3 | Jenderal Subagyo Hadisiswoyo | Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) |
| 4 | Mayor Jenderal Amirul Isnaeni (sudah meninggal dunia) | Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat (Waaspam KSAD) Wakil Penguasa Darurat Militer, Timor Timur (September 1999) |
| 5 | Letnan Jenderal Johnny Lumintang | Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) |
| 6 | Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim | Kepala BIA (sampai Januari 1999) Anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur |
| 7 | Laksamana Muda Yoost F. Mengko | Asisten Intelijen Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Asintel Kasum) |
| 8 | Brigadir Jenderal Mahidin Simbolon | Kepala Staf Komando Daerah Militer IX/Udayana |
| 9 | Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin | Asisten Teritorial Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Aster Kasum) |
| 10 | Letnan Jenderal Tyasno Sudarto | Kepala BAIS (sebelum April 1999, BIA) |
| 11 | Letnan Jenderal Sugiono | Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Kasum) |
| 12 | Mayor Jenderal Endriartono Sutarto | Asisten Operasi Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Asops Kasum) |
| 13 | Mayor Jenderal Kiki Syahnakri | Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (Asops KSAD) Penguasa Darurat Militer Timor Timur (September 1999) |
| 14 | Mayor Jenderal Syahrir M.S. | Komandan Jenderal Kopassus |
| 15 | Jenderal Wiranto | Panglima Tentara Nasional Indonesia & Menteri Pertahanan dan Keamanan |
| 16 | Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono | Kepala Staf Teritorial Tentara Nasional Indonesia (Kaster) |
| Perwira Militer (Daerah Militer IX dan Timor Timur) | | |
| 1 | Letnan Kolonel Ahmad Mas Agus | Komandan Komando Distrik Militer 1635/Covalima |
| 2 | Mayor Jenderal Adam R. Damiri | Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana |
| 3 | Letnan Kolonel Gustaf Hero | Komandan Komando Distrik Militer 1630/Viqueque |
| 4 | Letnan Kolonel Hisar Richard Hutajulu | Komandan Komando Distrik Militer 1628/Baucau |
| 5 | Letnan Kolonel Liliek Koeshadianto | Komandan Komando Distrik Militer 1635/Covalima |
| 6 | Kolonel Irwan Kusnadi | Komandan Sektor A, Timor Timur (setelah 21 Juni 1999) |

| | | |
|----|--|---|
| 7 | Letnan Kolonel Asep Kuswadi | Komandan Komando Distrik Militer 1638/Liquiçá |
| 8 | Kolonel Gerhan Lantara | Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 (Brigif Linud 17) Komandan Darurat Militer Sektor A Timor Timur (9-27 September 1999) |
| 9 | Letnan Kolonel Kamiso Miran | Komandan Komando Distrik Militer 1639/Oecussi |
| 10 | Kolonel Mudjiono | Wakil Komandan Komando Resor Militer 164/WD (sampai Mei atau Juni 1999) |
| 11 | Kolonel Noer Muis | Komandan Komando Resor Militer 164/WD (mulai 13 Agustus 1999) |
| 12 | Letnan Kolonel Muhamad Nur | Komandan Komando Distrik Militer 1637/Ermera |
| 13 | Letnan Kolonel Endar Priyanto | Komandan Komando Distrik Militer 1627/Dili (sampai 9 Agustus 1999) |
| 14 | Letnan Kolonel Nyus Rahasia (Nus Rahardja) | Wakil Komandan Sektor B Timor Timur |
| 15 | Mayor Maman Rahman | Komandan Komando Distrik Militer 1632/Aileu |
| 16 | Letnan Kolonel Paulus Gatot Rudianto | Komandan Komando Distrik Militer 1633/Ainaro |
| 17 | Letnan Kolonel Hardiono Saroso | Kepala Staf Komando Resor Militer 164/WD |
| 18 | Mayor Jacob Djoko Sarosa | Komandan Batalion Infanteri 745 |
| 19 | Letnan Kolonel Burhanuddin Siagian | Komandan Komando Distrik Militer 1636/Bobonaro |
| 20 | Mayor Drs. H.M. Sinaga | Komandan Komando Distrik Militer 1634/Manufahi |
| 21 | Letnan Kolonel Soedjarwo | Komandan Batalion Infanteri 303 Kostrad Komandan Komando Distrik Militer 1627/Dili (mulai 9 Agustus 1999) |
| 22 | Letnan Kolonel Sudrajat | Komandan Komando Distrik Militer 1629/Lautém |
| 23 | Letnan Kolonel Yayat Sudrajat | Komandan Satgas Tribuana VIII (Kopassus), Timor Timur Komandan Satuan Tugas Intelijen (SGI), Komando Resor Militer 164/WD |
| 24 | Letnan Kolonel Djoko Sukarsono | Komandan Komando Distrik Militer 1630/Viqueque |
| 25 | Letnan Kolonel Sulastiyono | Komandan Komando Distrik Militer 1631/Manatuto |
| 26 | Kolonel Sunarko | Asisten Intelijen Komandan Jenderal Kopassus Komandan Sektor A, Timor Timur (sampai 21 Juni 1999) |
| 27 | Letnan Kolonel Bambang Sungesti | Komandan Komando Distrik Militer 1639/Oecussi |
| 28 | Letnan Kolonel Supadi | Kepala Staf Komando Resor Militer 164/WD |
| 29 | Kolonel Tono Suratman | Komandan Komando Resor Militer 164/WD (sampai 13 Agustus 1999) |
| 30 | Letnan Kolonel Suwondo | Komandan Komando Distrik Militer 1634/Manufahi |
| 31 | Mayor Jenderal Kiki Syahnakri | Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat Penguasa Darurat Militer Timor Timur (September 1999) |

| | | |
|----|-------------------------------|--|
| 32 | Mayor R.M. Bambang Wisnumurty | Kepala Seksi Intelijen Komando Resor Militer 164/WD |
| 33 | Letnan Kolonel Yakraman Yagus | Komandan Batalion Infanteri 744, Timor Timur |
| 34 | Kolonel Tatang Zaenuddin | Komandan Sektor B, Timor Timur (sampai 21 Juli 1999) |

Perwira Polisi

| | | |
|----|--|--------------------------------------|
| 1 | Letnan Kolonel (Pol.) Ery T.B. Gultom | Kepala Kepolisian Resor Ermera |
| 2 | Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Hulman Gultom | Kepala Kepolisian Resor Dili |
| 3 | Letnan Kolonel (Pol.) Bambang Hermanu | Kepala Kepolisian Resor Aileu |
| 4 | Mayor (Pol.) Drs. Joko Irianto | Kepala Kepolisian Resor Liquiçá |
| 5 | Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Sodak C. Marpaung | Kepala Kepolisian Resor Baucau |
| 6 | Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Wilmar Marpaung | Kepala Kepolisian Resor Oecussi |
| 7 | Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rachim | Kepala Kepolisian Resor Manufahi |
| 8 | Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Abdul Rahman | Kepala Kepolisian Resor Viqueque |
| 9 | Mayor (Pol.) Drs. Rizali SH | Kepala Kepolisian Resor Ainaro |
| 10 | Letnan Kolonel (Pol.) Adios Salova | Kepala Kepolisian Resor Liquiçá |
| 11 | Kolonel Timbul Silaen | Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur |
| 12 | Letnan Kolonel (Pol.) Gatot Subiaktoro | Kepala Kepolisian Resor Covalima |
| 13 | Letnan Kolonel (Pol.) Drs. J. A. Sumampow | Kepala Kepolisian Resor Manatuto |
| 14 | Mayor (Pol.) Drs. Budi Susilo | Kepala Kepolisian Resor Bobonaro |
| 15 | Letnan Kolonel (Pol.) Drs. Irsan Wijaya | Kepala Kepolisian Resor Lautém |

Pejabat Sipil (Nasional)

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Ali Alatas | Menteri Luar Negeri |
| 2 | Mayor Jenderal (Purn.) H.R. Garnadi | Asisten I Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan |
| 3 | B.J. Habibie | Presiden |
| 4 | Letnan Jenderal (Purn.) A.M. Hendropriyono | Menteri Transmigrasi dan Pemukiman |
| 5 | Brigadir Jenderal Glenny Khairupan | Anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur |
| 6 | Letnan Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan |

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 7 | Mayor Jenderal Sintong Panjaitan | Penasihat Militer Presiden Habibie |
| 8 | Mayor Jenderal (Purn.) Yunus Yosfiah | Menteri Penerangan |

| Pejabat Sipil (Timor Timur) | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | Nazario José Tilman de Andrade | Bupati Manufahi |
| 2 | Filomeno Misquito da Costa | Bupati Oecussi |
| 3 | Martino Fernandes | Bupati Viqueque |
| 4 | Leoneto Martins | Bupati Liquiçá |
| 5 | Guilherme dos Santos | Bupati Bobonaro |
| 6 | Evaristo Doutel Sarmento | Bupati Ainaro |
| 7 | Vidal Doutel Sarmento | Bupati Manatuto |
| 8 | Kolonel Herman Sedyono | Bupati Covalima |
| 9 | Edmundo da Conceição Silva | Bupati Lautém |
| 10 | Constantino Soares | Bupati Ermera |
| 11 | Domingos M.D. Soares | Bupati Dili |
| 12 | Kolonel (Purn.) Suprpto Tarman | Bupati Aileu |

Tabel 3: Kelompok milisi pro-Indonesia di Timor-Leste, 1999

| Kabupaten | Kelompok milisi |
|-----------|--|
| Alieu | AHI |
| Ainaro | Mahidi, Laksaur |
| Baucau | Saka, Sera, Forum Komunikasi Partisan (FKP) |
| Bobonaro | Halilintar, Dadurus Merah Putih (DMP), Firmi Merah Putih, Saka Loromonu, Armui Merah Putih, Guntur Merah Putih, Hametin Merah Putih, Harimau Merah Putih, Kaer Metin Merah Putih |
| Covalima | Laksaur, Mahidi |
| Dili | Aitarak |
| Ermera | Darah Integrasi, Darah Merah, Naga Merah, Tim Pancasila, Aitarak |
| Lautém | Tim Alfa |
| Liquiçá | Besi Merah Putih (BMP), Pana |
| Manatuto | Morok, Mahadomi |
| Manufahi | ABLAI |
| Oecussi | Sakunar |
| Viqueque | Makikit, 59/75 Junior |

Kronologi: Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor-Leste *

1960

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan “Timor dan wilayahnya” dalam daftar wilayah tak berpemerintahan sendiri. Timor-Leste diperintah oleh Portugal sebagai wilayah provinsi seberang lautan.

1974

Menyusul perubahan Pemerintah, Portugal mengakui berlakunya ketentuan-ketentuan Piagam PBB tentang wilayah tak berpemerintahan sendiri dan hak wilayah kolonial di bawah pemerintahannya, termasuk Timor-Leste, untuk menentukan nasib sendiri, yang mencakup kemerdekaan.

1975

Setelah bentrokan kekerasan terjadi di antara kelompok-kelompok yang menginginkan kemerdekaan dan yang menginginkan integrasi dengan Indonesia, Portugal meninggalkan wilayah tersebut dan Indonesia menginvasi Timor-Leste.

1976

Indonesia menganeksasi Timor-Leste sebagai provinsinya yang ke-27. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah mengakui integrasi ini.

1982

Sekretaris Jenderal PBB memulai pembicaraan tidak resmi dengan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal dengan tujuan memperbaiki situasi kemanusiaan di Timor-Leste dan menyelesaikan status wilayah tersebut.

1995

Sekretaris Jenderal memulai suatu proses untuk mengembangkan dialog antar-rakyat Timor-Leste dengan menyediakan satu forum untuk orang Timor-Leste dari semua pandangan politik untuk menjajaki gagasan-gagasan untuk memperbaiki keadaan.

1998

Pada Juni, Presiden Indonesia B.J. Habibie mengusulkan otonomi untuk Timor-Leste dengan syarat rakyat Timor-Leste menerima integrasi ke Indonesia. Usulan itu ditolak oleh para pemimpin perlawanan Timor-Leste.

Mulai Agustus sampai Oktober, Sekretaris Jenderal Kofi Annan bersama Menteri Luar Negeri Indonesia dan Portugal, mengadakan pembahasan mendalam tentang usulan Indonesia mengenai status khusus berdasarkan otonomi luas bagi Timor-Leste.

1999

27 Januari

Presiden Habibie menyatakan dalam satu pernyataan publik bahwa pemerintahnya mungkin siap untuk mempertimbangkan kemerdekaan bagi Timor-Leste. Pembicaraan dimulai di New York antara Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Jamsheed Marker, dan Direktur Jenderal Departemen Luar Negeri Indonesia dan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Portugal.

11 Maret

Pada perundingan tiga pihak tingkat menteri di New York, dicapai kesepakatan mengenai penggunaan pemungutan suara langsung untuk meminta pendapat rakyat Timor-Leste tentang apakah mereka menerima atau menolak usulan otonomi.

21 April

Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyambut penandatanganan kesepakatan yang diprakarsai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, yang mewajibkan semua pihak di Timor-Leste untuk mengakhiri kekerasan di Wilayah itu.

5 Mei

Perundingan-perundingan di New York menghasilkan serangkaian kesepakatan antara Indonesia dan Portugal. Kedua Pemerintah mempercayakan kepada Sekretaris Jenderal untuk menyelenggarakan suatu “Konsultasi Rakyat” dalam rangka memastikan apakah rakyat Timor-Leste menerima atau menolak otonomi khusus untuk Timor-Leste di dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

1 Juni

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (Special Representative of the Secretary-General – SRSG) di Timor-Leste yang baru ditunjuk, Ian Martin tiba di Dili, Timor-Leste.

11 Juni

Dewan Keamanan PBB secara resmi membentuk UNAMET sampai dengan akhir Agustus 1999. Dalam resolusi 1246 (1999) yang diadopsi secara bulat, Dewan mengesahkan usulan Sekretaris Jenderal untuk membentuk satu misi yang anggotanya mencakup sejumlah 280 orang perwira polisi sipil untuk memberikan saran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 50 orang perwira penghubung militer untuk memelihara hubungan dengan Tentara Nasional Indonesia. Dewan menegaskan kembali tanggung jawab pemerintah Indonesia memelihara perdamaian dan keamanan di Timor-Leste untuk menjamin integritas pemungutan suara dan keamanan bagi staf dan pengamat internasional.

* *Dari situs jaringan publik Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNTAET), 2002.*

18 Juni

Pada satu konferensi pers di Dili, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Ian Martin mengatakan bahwa kekerasan yang terus berlanjut telah memaksa puluhan ribu rakyat Timor-Leste meninggalkan rumah mereka, menciptakan suatu “hambatan serius” bagi persiapan pemungutan suara mengenai masa depan wilayah itu.

23 Juni

Sekretaris Jenderal Kofi Annan memutuskan menunda pemungutan suara Timor-Leste selama dua minggu, dengan menyebut kekerasan yang tidak menyusut dan persoalan logistik sebagai penyebab. Ketika melapor kepada Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal mengatakan bahwa keadaan keamanan dan tidak adanya kesempatan yang sama untuk semua pihak tidak memungkinkan proses konsultasi ini bergerak maju. Pendaftaran pemilih ditunda sampai 13 Juli untuk memberikan waktu bagi penempatan staf PBB di seluruh wilayah itu dan memberikan waktu kepada pihak berwenang Indonesia untuk mengatasi masalah keamanan.

6 Juli

Setelah terjadinya serangan terhadap personel PBB di Maliana dan Liquiçá, para anggota Dewan Keamanan menuntut penghentian segera kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh milisi di Wilayah itu.

16 Juli

Pendaftaran pemilih dimulai setelah penundaan selama tiga hari untuk memberikan waktu kepada pihak berwenang Indonesia untuk menyelesaikan masalah keamanan yang masih ada.

5 Agustus

Pendaftaran pemilih ditutup. UNAMET telah mendaftar 451.792 orang calon pemilih di antara lebih daripada 800.000 orang penduduk yang tinggal di Timor-Leste dan di luar negeri.

9 Agustus

Para pendukung dan penentang usulan otonomi untuk Timor-Leste menandatangani ketentuan tata tertib untuk masa kampanye sebelum pemungutan suara tanggal 30 Agustus.

14 Agustus

Kampanye untuk Konsultasi Rakyat dimulai.

18 Agustus

Menanggapi peningkatan kegiatan milisi, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal (SRSG) Ian Martin, Duta Besar Agus Tarmidzi, Ketua Satuan Tugas Indonesia,

dan para pejabat penting kepolisian Indonesia mengunjungi Viqueque, Suai, dan Maliana, di mana mereka membahas langkah-langkah pengamanan tambahan bersama dengan kepolisian, militer, dan pemerintah lokal.

19 Agustus

Para pemimpin Timor-Leste dari kelompok-kelompok prokemerdekaan dan pro-otonomi menyepakati pembentukan satu komisi beranggotakan 25 orang untuk memperkuat rekonsiliasi dan kerjasama di wilayah itu sebelum hasil pemungutan suara yang diselenggarakan oleh PBB dilaksanakan.

20 Agustus

Tindak kekerasan mencemari kampanye di Timor-Leste ketika milisi prointegrasi mengganggu rakyat yang menghadiri rapat umum prokemerdekaan di Suai. Di Manatuto, perwira penghubung militer yang bertugas di UNAMET diancam oleh milisi.

24 Agustus

Pihak berwenang Indonesia memberikan jaminan kepada UNAMET bahwa mereka akan berusaha menciptakan suasana yang aman. Para anggota Dewan Keamanan mengungkapkan keprihatinan mendalam mereka pada berlanjutnya intimidasi dan kekerasan di Timor-Leste dan menyerukan kepada semua pihak agar memenuhi janji mereka untuk melucuti dan menyimpan senjata mereka.

26 Agustus

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Ian Martin mengatakan dalam satu konferensi pers di Dili bahwa PBB berkehendak melanjutkan pemungutan suara walaupun kekerasan yang mematikan merebak belakangan ini. Di New York, dalam satu rapat Dewan Keamanan perwakilan Indonesia menjanjikan komitmen negaranya untuk menjamin adanya suasana yang aman, sebagaimana yang diharuskan dalam Kesepakatan 5 Mei.

Dewan Keamanan memperpanjang mandat UNAMET sampai 30 November. Dalam satu keputusan bulat, Dewan mengadopsi resolusi 126 (1999) mengesahkan usulan Sekretaris Jenderal untuk mengubah susunan Misi PBB di Timor-Leste untuk tahap peralihan setelah pemungutan suara 30 Agustus.

27 Agustus

UNAMET memfasilitasi pertemuan bersejarah antara para pejuang kemerdekaan Falintil dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tempat kantonisasi utama Falintil di Timor-Leste.

29 Agustus

Sehari menjelang pelaksanaan Konsultasi Rakyat, Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan seruan kepada rakyat Timor-Leste agar semua pihak “menjalankan tanggungjawabnya di hadapan sejarah”.

30 Agustus

UNAMET menyatakan bahwa setidaknya 95 persen dari para pemilih yang terdaftar memberikan suara mereka dalam Konsultasi Rakyat; jumlah pemilih seluruhnya lebih daripada 430.000 orang.

31 Agustus

Para anggota Komisi Konsultasi Rakyat Timor-Leste bersidang untuk pertama kalinya. Komisi ini terdiri atas masing-masing 10 orang anggota dari kubu prokemerdekaan dan pro-otonomi, serta lima orang anggota yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB.

1 September

Kekerasan meledak di luar kompleks UNAMET di Dili ketika anggota-anggota milisi menyerang pendukung-pendukung prokemerdekaan.

2 September

Milisi prointegrasi, yang dalam kasus-kasus tertentu memperoleh dukungan dari unsur-unsur pasukan keamanan Indonesia, melancarkan serangan kekerasan, penjarahan, dan pembakaran harta-benda di seluruh Timor-Leste.

4 September

UNAMET mengumumkan hasil pemungutan suara: 94.388 suara atau 21,5 persen rakyat Timor-Leste memberikan suara pada usulan otonomi khusus dan 344.580 suara atau 78,5 persen memberikan suara menentang. Seluruhnya sebanyak 446.953 orang Timor-Leste memberikan suaranya di dalam dan di luar wilayah tersebut.

5 September

Sekretaris Jenderal PBB meningkatkan usahanya untuk memastikan Indonesia melakukan tindakan mendesak untuk mengendalikan keadaan di dalam batas waktu tertentu, atau memastikan Indonesia memberikan kesepakatan bagi penempatan segera suatu pasukan keamanan internasional.

8 September

Satu delegasi yang terdiri atas lima anggota Dewan Keamanan dikirimkan ke Jakarta dan Timor-Leste untuk membahas dengan Pemerintah Indonesia tentang langkah-langkah konkret untuk pelaksanaan damai Kesepakatan 5 Mei. Di New York anggota Dewan Keamanan mendukung pandangan Sekretaris Jenderal bahwa jika keadaan keamanan di Timor-Leste tidak membaik “dalam waktu yang sangat singkat,” mereka akan harus mempertimbangkan tindakan lebih lanjut untuk membantu Pemerintah Indonesia menyelesaikan krisis yang sedang terjadi di wilayah itu.

10 September

Ketika keadaan tanpa hukum meningkat di Timor-Leste dan anggota-anggota milisi mengancam akan menyerang kompleks PBB di Dili, Sekretaris Jenderal

PBB secara terbuka mendesak Pemerintah Indonesia untuk menerima tawaran bantuan dari sejumlah Pemerintah, termasuk Australia, Selandia Baru, Filipina, dan Malaysia, “tanpa menunda lagi.” Jika Pemerintah Indonesia menolaknya, katanya dalam satu konferensi pers, maka ia tidak dapat lari dari tanggung jawab “atas sesuatu yang bisa jadi merupakan, menurut laporan-laporan yang kami terima, kejahatan terhadap umat manusia.”

12 September

Ketika lima anggota delegasi tersebut mengakhiri kunjungannya ke Jakarta, Pemerintah Indonesia setuju menerima tawaran bantuan dari masyarakat internasional. Dewan Keamanan mengesahkan satu pasukan multinasional (INTERFET) di bawah struktur komando tunggal yang dipimpin oleh Australia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memulai usaha bantuan kemanusiaan berskala besar. Pada saat yang sama, perhatian yang meningkat diberikan kepada kepulauan sukarela sekitar 250.000 orang Timor-Leste dari Timor Barat dan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan kawasan.

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai mundur dari Timor-Leste.

28 September

Indonesia dan Portugal, pada satu rapat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menegaskan kembali kesepakatan mereka untuk pengalihan kekuasaan di Timor-Leste kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka juga sepakat tentang perlunya tindakan-tindakan *ad hoc* untuk mengisi kekosongan akibat kepergian dini pemerintah sipil Indonesia.

UNAMET mendirikan kembali markas besarnya di Dili dan segera memulai usaha-usaha untuk memulihkan kapasitas logistiknya dan menempatkan kembali personel UNAMET ketika kondisi memungkinkan.

19 Oktober

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengakui hasil Konsultasi Rakyat.

25 Oktober

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi 1272 (1999) mendirikan Pemerintah Transisi PBB di Timor-Leste (United Nations Transitional Administration in East Timor – UNTAET). Misi ini terdiri atas tiga unsur utama: pemerintahan dan administrasi publik; bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi darurat; dan satu unsur militer dengan kekuatan resmi mencapai 8.950 prajurit dan 200 pengamat militer.

27 Oktober

Seruan Gabungan Antar-Lembaga untuk Timor-Leste (Consolidated Inter-Agency Appeal for East Timor), yang dipimpin oleh Bank Dunia, diluncurkan

di Jenewa untuk mengumpulkan uang sejumlah USD199 juta guna memenuhi kebutuhan mendesak kemanusiaan hingga Juni 2000.

1 November

Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terakhir meninggalkan Timor-Leste. Akhir dari pendudukan selama 24 tahun ditandai dengan upacara perpisahan yang dihadiri oleh para anggota Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Timor Timur, TNI, para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta pemimpin perlawanan rakyat Timor-Leste dan Presiden Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Timor-Leste (CNRT) Xanana Gusmão.

Misi penilaian antarlembaga yang dipimpin oleh Bank Dunia tiba di Dili dan mengadakan rapat di markas besar UNTAET dengan Xanana Gusmão dan Pejabat SRSG Ian Martin.

2 November

Milisi yang bermusuhan menghalangi usaha UNHCR di kamp-kamp pengungsi Timor Barat di kawasan Atambua sehingga perlu dilakukan tindakan polisi.

8 November

Tiga Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa memulai penyelidikan awal mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste.

15 November

Dewan Sosial dan Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC – Economic and Social Council) mengesahkan penyelenggaraan satu penyelidikan internasional terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste. Dewan melakukan pemungutan suara dengan hasil 27-10, dengan 11 suara abstain, mendukung satu resolusi yang disusun oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengirimkan para ahli dengan tugas mengumpulkan keterangan tentang kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di Timor-Leste sejak Januari 1999.

17 November

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (SRSG) dan Administrator Transisi yang baru ditunjuk Sergio Vieira de Mello mulai bertugas di Timor-Leste.

17 November

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (SRSG) dan Administrator Transisi yang baru ditunjuk Sergio Vieira de Mello mulai bertugas di Timor-Leste.

21 November

Komisi internasional penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste beranggotakan lima orang tiba di Dili. Komisi itu dipimpin oleh Sonia Picado.

22 November

SRSG pergi ke Timor Barat di mana ia dan Duta Besar Amerika Serikat Richard Holbrooke menyaksikan penandatanganan satu perjanjian antara INTERFET dan Tentara Nasional Indonesia yang dibuat untuk mempercepat kembalinya pengungsi dari Timor Barat.

UNHCR melaporkan bahwa walaupun gangguan dari milisi terus berlanjut, lebih daripada 90.000 orang telah kembali ke Timor-Leste.

27 November

SRSG menandatangani yang pertama dari serangkaian ketentuan hukum yang menentukan dasar dari pemerintahan UNTAET di Wilayah itu. Regulasi No. 1/1999 menetapkan kewenangan Administrator Transisi dan tata hukum untuk Wilayah itu.

1 Desember

José Ramos-Horta, Penerima Penghargaan Nobel, kembali ke Timor-Leste setelah 24 tahun di pengasingan. Ia disertai oleh SRSG.

2 Desember

SRSG menandatangani Regulasi No. 2/1999 tentang pembentukan Dewan Konsultasi Nasional (National Consultative Council – NCC) satu badan bersama Timor-Leste-UNTAET beranggotakan 15 orang. Melalui badan ini para wakil rakyat Timor-Leste dapat ambil bagian aktif di dalam proses pembuatan keputusan selama masa transisi.

3 Desember

UNTAET menetapkan, melalui regulasi No. 3/1999, satu Komisi Dinas Peradilan Transisi yang terdiri atas lima orang, yaitu tiga orang Timor-Leste dan dua orang internasional.

17 Desember

Satu konferensi donor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Tokyo menghasilkan bantuan lebih daripada USD500 juta dalam bentuk janji untuk membangun kembali Timor-Leste.

20 Desember

Pengamat militer PBB menemukan satu perkuburan massal di wilayah kantong Timor-Leste Oecussi. Delapan belas tempat penguburan dibongkar, beberapa di antaranya berisi lebih daripada satu mayat.

2000

3 Januari

UNTAET resmi mengambil kendali atas Pelabuhan Udara Dili. Satu perusahaan penerbangan Australia mulai terbang tiga kali seminggu ke Darwin sejak tanggal 18 Januari.

12 Januari

UNTAET, INTERFET, dan para pejabat militer Indonesia menandatangani Memorandum Kesepahaman yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama di perbatasan antara Timor-Leste dan Timor Barat.

19 Januari

UNTAET, yang bertindak atas nama Timor-Leste menandatangani Memorandum Kesepahaman yang memperpanjang masa berlaku Perjanjian Celah Timor dengan Pemerintah Australia.

21 Januari

Sekretaris Jenderal PBB menunjuk Letnan Jenderal Jaime de los Santos dari Filipina sebagai Panglima Pasukan unsur militer UNTAET.

31 Januari

Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan laporan pertamanya tentang kerja UNTAET. Ia mengatakan bahwa bencana kemanusiaan yang terjadi setelah Konsultasi Rakyat telah menjadi krisis yang paling menekan yang dihadapi oleh UNTAET.

15 Februari

Sekretaris Jenderal PBB memulai kunjungan resmi ke Jakarta selama dua hari, yang merupakan kunjungan pertamanya sejak menduduki jabatan, dan bertemu dengan para pejabat Indonesia.

17 Februari

Sekretaris Jenderal tiba di Timor-Leste untuk kunjungan selama dua hari. Di Dili ia bertemu dengan pemimpin gerakan kemerdekaan Xanana Gusmão, Penerima Penghargaan Nobel Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, dan Uskup Basilio Nascimento.

21 Februari

Presiden Bank Dunia James Wolfensohn, Xanana Gusmão, dan SRSG menandatangani perjanjian hibah untuk pencairan dana sebesar USD 21,5 juta selama dua setengah tahun untuk pemberdayaan masyarakat dan proyek-proyek pemerintah lokal.

23 Februari

INTERFET secara resmi menyerahkan komando militernya atas Wilayah itu kepada UNTAET.

Rencana eksploitasi gas senilai USD1,4 juta di Celah Timor disetujui.

28 Februari

UNTAET dan INTERFET menuntaskan pengaturan administratif untuk pengalihan tanggung jawab keamanan.

29 Februari

Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid mengunjungi Timor-Leste. Presiden menandatangani satu komunike dengan SRSG, menetapkan, antara lain, satu peraturan perbatasan untuk lalu lintas orang dan barang antara Timor-Leste dan Indonesia, kerjasama dalam bidang hukum, dan kelanjutan bantuan bagi mahasiswa Timor-Leste yang ingin belajar di universitas-universitas di Indonesia.

3 Maret

Serangkaian serangan bersenjata terhadap pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan orang Timor-Leste menyebabkan UNTAET menyatakan wilayah bagian barat sebagai wilayah dengan “ancaman tinggi.”

27 Maret

Satu sekolah kepolisian yang didukung oleh UNTAET dibuka di Dili.

29 Maret

SRSG dan Jaksa Agung Indonesia, Marzuki Darusman, menetapkan satu kesepakatan sementara delapan minggu mengenai pemberian bantuan timbal-balik dalam bidang hukum, peradilan, dan hak asasi manusia.

31 Maret

Pemerintah Indonesia menambah waktu selama tiga bulan untuk batas waktu pengembalian pengungsi dan menarik keputusannya untuk menghentikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi, dengan mengemukakan bahwa akan meminta bantuan dari masyarakat internasional.

SRSG meminta Menteri Pertahanan Indonesia, Mahfud MD, untuk mengendalikan setiap “ekstremis” dan menghentikan serangan milisi ke Timor-Leste oleh milisi yang berpangkalan di Indonesia. Menteri Pertahanan mengatakan bahwa tentara maupun polisi Indonesia tidak terlibat mendukung kelompok-kelompok milisi di Timor Barat.

3 April

UNTAET, Bank Dunia, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme – UNDP) menandatangani satu perjanjian hibah sebesar USD499.000 untuk proyek penciptaan lapangan kerja bagi golongan masyarakat miskin di Dili.

5 April

UNTAET mengumumkan keputusannya untuk menunjuk orang Timor-Leste pada posisi-posisi administratif tinggi di dalam pemerintah baru di Dili, yaitu sebagai wakil administrator distrik dan wakil kepala departemen. SRSG mengumumkan pembentukan Dewan Penasihat Distrik untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Timor-Leste untuk menyuarakan pandangannya mengenai semua persoalan penting.

11 April

Panglima Pasukan UNTAET dan Komandan Tentara Nasional Indonesia di Timor Barat menandatangani Memorandum Kesepahaman mengenai keamanan, lintas perbatasan, pengembalian pengungsi, dan bantuan kemanusiaan di sepanjang perbatasan antara Timor-Leste dan Timor Barat. Memorandum Kesepahaman menegaskan Memorandum 12 Januari, menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak diperbolehkan membawa senjata melintasi perbatasan dan menegaskan bahwa kedua pihak sepakat bekerjasama untuk melaporkan dan menyelidiki insiden di perbatasan.

28 April

Dinas Pos Timor-Leste mulai beroperasi.

12 Mei

Pengadilan Distrik Dili membuka sidang terbuka pertamanya.

19 Mei

Lebih daripada delapan puluh orang dipastikan meninggal, sebagian besar dari mereka pengungsi Timor-Leste, dalam banjir besar yang melanda Timor Barat. Sekitar 21.000 orang diperkirakan meninggalkan rumah, 16.000 di antaranya berasal dari 21 kamp pengungsi Timor-Leste di Kabupaten Belu di Timor Barat bagian tenggara.

30 Mei

Pada pembukaan Konferensi tentang Rekonstruksi Timor-Leste yang diadakan di Dili, UNTAET menyarankan satu periode pemerintahan bersama antara UNTAET dan Timor-Leste sebelum pengalihan kekuasaan penuh.

7 Juni

UNTAET dan Bank Dunia menandatangani hibah sebesar USD12,7 juta untuk membantu memperbaiki sektor kesehatan Timor-Leste.

8 Juni

SRSG dan Xanana Gusmão bertemu dengan Gubernur Timor Barat untuk membahas bagaimana mempercepat pemulangan pengungsi dan meningkatkan perdagangan di pulau Timor.

20 Juni

UNHCR dan organisasi-organisasi bantuan lainnya menghentikan kegiatan di tiga kamp pengungsi di dekat Kupang, menyusul apa yang digambarkan sebagai insiden keamanan yang serius ancaman dan intimidasi terhadap staf mereka.

21 Juni

UNTAET dan CNRT menyetujui satu struktur dan komposisi baru untuk Dewan Konsultasi Nasional (National Consultative Council – NCC). NCC yang baru diperluas ini akan beranggotakan 33 orang. Para anggota meliputi 13 wakil distrik, tujuh wakil dari CNRT, dan tiga wakil dari kelompok-kelompok politik lainnya. Anggota-anggota lainnya mewakili kelompok pemuda, kelompok perempuan, organisasi nonpemerintah, serta komunitas Katolik, Protestan dan Muslim, asosiasi profesional dan petani, gerakan buruh, dan komunitas bisnis. Semua anggota termasuk ketua NCC adalah orang Timor-Leste.

23 Juni

Di Lisabon, komunitas donor menjanjikan kelanjutan dukungan untuk rekonstruksi Timor-Leste dan administrasi pemerintah baru Timor-Leste, dan mengesahkan satu program kerja untuk pembangunan Wilayah itu hingga Desember 2000. Para donor mengisyaratkan dukungan mereka untuk menutup kekurangan pembiayaan sejumlah USD16 juta untuk tahun anggaran selanjutnya.

12 Juli

NCC mengesahkan satu regulasi menetapkan satu Kabinet Transisi yang terdiri atas empat orang Timor-Leste dan empat orang dari UNTAET.

Sekretaris Jenderal menunjuk Letnan Jenderal Boonsrang Niumpradit dari Muangthai sebagai Panglima Pasukan unsur militer UNTAET mulai 19 Juli 2000.

50 orang lulus pertama Akademi Kepolisian Timor-Leste secara resmi melaksanakan tugasnya sebagai petugas polisi.

17 Juli

Kabinet Transisi mengadakan rapat pertamanya di Dili.

24 Juli

Seorang prajurit UNTAET dari kontingen Selandia Baru terbunuh menyusul tembak-menembak dengan satu kelompok bersenjata di dekat perbatasan dengan Timor Barat. Ini kematian pertama yang terkait dengan pertempuran seorang penjaga perdamaian PBB di Timor-Leste.

27 Juli

Pada pertemuan di Indonesia antara SRSG, Panglima Pasukan UNTAET, dan Komandan TNI di Timor Barat, Mayor Jenderal Kiki Syahnakri, disepakati pembentukan satu komite *ad hoc* bersama yang terdiri atas Tentara Nasional Indonesia dan pasukan penjaga perdamaian PBB, untuk menyelidiki pembunuhan terhadap prajurit UNTAET pada 24 Juli.

31 Juli

UNTAET meresmikan program pelatihan diplomatik Timor-Leste pertama di Dili.

3 Agustus

Dewan Keamanan menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar bekerjasama erat dengan PBB untuk mengakhiri serangan lintas batas dari Timor Barat dan melucuti milisi yang masih beroperasi di wilayah perbatasan.

10 Agustus

Seorang prajurit UNTAET dari kontingen Nepal terbunuh dalam tembakan-menembak dengan milisi di Suai dekat perbatasan dengan Timor Barat.

23 Agustus

Satu delegasi tingkat tinggi Indonesia memberikan penjelasan kepada SRSG tentang kebijakan baru Pemerintah Indonesia mengenai pengungsi dan mengatakan bahwa kamp-kamp pengungsi di Timor Barat akan ditutup dalam waktu tiga sampai enam bulan dengan koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

25 Agustus

Hukuman pidana pertama di Timor-Leste dijatuhkan oleh Pengadilan Distrik Dili.

6 September

Tiga orang staf UNHCR dibunuh di Atambua, Timor Barat, menyusul serangan yang dilakukan oleh milisi bersenjata terhadap kantor UNHCR.

8 September

Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 1319 yang mendesak “bahwa pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah segera, dalam pemenuhan tanggungjawabnya, melucuti dan membubarkan segera milisi, memulihkan hukum dan ketertiban di wilayah-wilayah yang terkena di Timor Barat, menjamin keselamatan dan keamanan di kamp-kamp pengungsi dan untuk para pekerja kemanusiaan, serta mencegah penyerangan lintas batas ke wilayah Timor-Leste”.

12 September

Kabinet Transisi Timor-Leste menyetujui pembentukan Angkatan Pertahanan Timor-Leste (East Timor Defence Force – ETDF) dengan bekas prajurit Falintil menjadi kekuatan inti berkekuatan 3.000 orang.

23 Oktober

Presiden CNRT Xanana Gusmão dipilih menjadi ketua Dewan Nasional (National Council – NC) Timor-Leste, satu badan pendahulu parlemen Timor-Leste.

10 November

Satu delegasi Dewan Keamanan mengunjungi Timor Barat dan Timor-Leste untuk membahas pelaksanaan resolusi 1272, yang memberi mandat kepada UNTAET untuk mempersiapkan Timor-Leste menuju kemerdekaan. Di Timor Barat, delegasi meninjau pelaksanaan resolusi 1319, khususnya perlunya melucuti dan membubarkan kelompok-kelompok milisi dan pemulangan pengungsi ke Timor-Leste.

15 November

Universitas Nasional Timor Lorosae dibuka.

1 Desember

Surat dakwaan pertama terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan berat di Timor-Leste disampaikan kepada Pengadilan Distrik Dili.

11 Desember

Surat dakwaan pertama yang berisi dakwaan “kejahatan terhadap umat manusia” yang dilakukan di Timor-Leste diajukan ke pengadilan.

13 Desember

Kabinet Transisi Timor-Leste menyepakati satu usulan untuk membentuk Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi.

2001

3 Januari

Tentara Nasional Indonesia dan pasukan perdamaian PBB sepakat untuk melancarkan operasi keamanan bersama di sepanjang perbatasan Timor-Leste dan provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia, di Timor Barat.

17 Januari

Kabinet Transisi Timor-Leste menyetujui rancangan regulasi-regulasi mengenai pendirian angkatan pertahanan untuk Timor-Leste dan mengenai pendaftaran partai-partai politik.

31 Januari

Melalui Resolusi 1338 (2001) Dewan Keamanan memperpanjang mandat UNTAET hingga 31 Januari 2002.

1 Februari

Pada satu upacara di Aileu yang menandai peralihan Falintil menjadi Angkatan Pertahanan Timor-Leste, Panglima Falintil Taur Matan Ruak ditunjuk sebagai Panglima Angkatan Pertahanan, dengan pangkat Brigadir Jenderal.

16 Maret

SRSG mengumumkan bahwa pemilihan umum demokratis yang pertama di Timor-Leste akan diadakan tanggal 30 Agustus 2001, setelah penandatanganan Regulasi tentang Pemilihan Umum Majelis Konstituante.

17 Maret

UNTAET memulai pendaftaran penduduk Timor-Leste, satu langkah penting ke arah penyelenggaraan pemilihan umum pertama anggota Majelis Konstituante.

4 Mei

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menghukum enam orang antara 10 dan 20 bulan penjara atas peran mereka dalam pembunuhan terhadap tiga orang staf UNHCR di Atambua, Timor Barat, 6 September 2000. Sekretaris Jenderal Kofi Annan menyebut hukuman yang ringan itu sebagai “tanggapan yang samasekali tidak bisa diterima.”

7 Mei

Pendaftaran partai politik dan kandidat independen untuk pemilihan umum anggota Majelis Konstituante dimulai.

9 Juni

Organisasi payung perlawanan Timor-Leste, CNRT, dibubarkan untuk membuka jalan bagi berbagai partai politik untuk ambil bagian dalam pemilihan umum mendatang.

23 Juni

Pendaftaran penduduk berakhir dengan angka 778.998 orang Timor-Leste yang terdaftar dan diberi kartu identitas sementara.

28 Juni

SRSG memberikan pidato kenegaraan yang pertama di hadapan Dewan Nasional Timor-Leste, dengan memberikan laporan yang terperinci dan mendalam tentang kerja dan kemajuan yang dicapai, tantangan-tantangan yang ada di depan, dan kembali menyerukan dibuatnya satu Pakta Kesatuan Nasional.

3 Juli

Disepakati satu Pengaturan antara Administrasi Transisi Timor-Leste dan Pemerintah Australia yang memberikan 90 persen pendapatan dari cadangan gas dan minyak di Laut Timor kepada Timor-Leste.

30 Agustus

Ratusan ribu orang Timor-Leste menuju ke tempat pemungutan suara untuk memilih para anggota Majelis Konstituante, dalam pemilihan umum demokratis Timor-Leste yang pertama.

6 September

Fretilin dinyatakan sebagai partai pemenang, dengan meraih 57,3% suara, dalam pemilihan umum Majelis Konstituante Timor-Leste.

20 September

Dua puluh empat orang anggota Dewan Menteri Pemerintah Transisi Kedua Timor-Leste disumpah di hadapan masyarakat luas di Dili. Dewan yang baru ini menggantikan Kabinet Transisi.

22 Oktober

Ketua Majelis Konstituante Francisco Guterres menandatangani satu resolusi mengadopsi rekomendasi majelis agar UNTAET menyerahkan kedaulatan kepada lembaga-lembaga pemerintah Timor-Leste terpilih pada 20 Mei 2002.

26 Oktober

Batalion pertama Angkatan Pertahanan Timor-Leste resmi dilantik.

31 Oktober

Dewan Keamanan mendukung rekomendasi Sekretaris Jenderal Kofi Annan agar PBB melanjutkan perannya di Timor-Leste setelah kemerdekaan wilayah itu tahun berikutnya, dengan menegaskan bahwa penarikan mundur yang terlalu dini kehadiran internasional akan dapat menimbulkan destabilisasi pada sejumlah bidang penting.

26 November

UNTAET memulai pengurangan kekuatan militer yang telah dijadwalkan. SRSG menyambut kedatangan di Timor-Leste Komisaris Polisi Sipil UNTAET yang baru Peter Miller yang berasal dari Kanada.

30 November

Majelis Konstituante menyetujui struktur umum rancangan pertama Konstitusi Timor-Leste.

11 Desember

Putusan bersalah yang pertama untuk kejahatan terhadap umat manusia dijatuhkan oleh Panel Kejahatan Berat Dili.

13 Desember

Konferensi Donor untuk Timor-Leste diadakan di Oslo, Norwegia, berakhir dengan ungkapan penghargaan dari negara-negara yang berpartisipasi pada kemajuan Timor-Leste dan perlunya memelihara momentum kemajuan yang telah dicapai sejauh ini.

2002

31 Januari

Dewan Keamanan secara bulat menerima resolusi 1392 (2002) yang memperpanjang mandat UNTAET sampai 20 Mei 2002.

Majelis Konstituante memilih mengubah dirinya menjadi parlemen pertama Timor-Leste setelah persetujuan akhir Konstitusi.

18 Februari

Jaksa penuntut internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mendakwa 17 orang milisi dan anggota Tentara Nasional Indonesia untuk kejahatan terhadap umat manusia yang diduga dilakukan pada 1999.

7 Maret

Seorang anggota milisi prointegrasi dinyatakan bersalah membunuh seorang anggota pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 24 Juli 2000 dan dihukum enam tahun penjara oleh satu pengadilan Indonesia.

22 Maret

Majelis Konstituante Timor-Leste menandatangani pemberlakuan Konstitusi pertama Timor-Leste.

14 April

Pemilihan presiden Timor-Leste diselenggarakan. Francisco Xavier do Amaral dan Xanana Gusmão menjadi calon.

17 April

Xanana Gusmão diumumkan sebagai Presiden terpilih Timor-Leste setelah memenangkan 82,7% suara dalam pemilihan umum presiden.

20 Mei

Timor-Leste menjadi negara merdeka.

Catatan tentang sumber

Kecuali sedikit perkecualian, dokumen-dokumen yang dikutip dalam laporan ini disimpan dalam arsip tertutup milik badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan pemerintah, dan organisasi-organisasi nonpemerintah. Kumpulan dokumen yang paling penting adalah milik: i) Unit Hak Asasi Manusia (Human Rights Unit – HRU) UNMISSET di Dili; ii) Unit Kejahatan Berat (Serious Crimes Unit – SCU) di Kantor Jaksa Agung Timor-Leste; dan iii) organisasi hak asasi manusia Yayasan HAK. Penulis beruntung karena diberi izin mempelajari berkas-berkas dari semua koleksi tersebut untuk keperluan penyusunan laporan ini. Untuk memudahkan pencarian kembali di masa mendatang dokumen-dokumen yang dikutip, asal-usul dari setiap dokumen dicantumkan pada setiap referensi, bersama dengan nomor dokumen yang bersangkutan. Jadi, dokumen-dokumen yang berasal dari Human Rights Unit (HRU) ditulis sebagai ‘Koleksi HRU, Doc. #X;’ yang berasal dari Serious Crimes Unit ditulis sebagai ‘Koleksi SCU, Doc. #X;’ dan yang berasal dari Yayasan HAK ditulis sebagai ‘Koleksi Yayasan HAK, Doc. #X.’

Beberapa bagian dari laporan ini berdasarkan pada karya-karya penulis yang telah diterbitkan. Pembahasan tentang militer Indonesia pada Bab 2 diambil dari: “Indonesia – On a New Course?” dalam Muthiah Alagappa (penyunting), *Coercion and Governance: The Declining Political Role of the Military in Asia*, Stanford: Stanford University Press, 2001, halaman 226-256. Beberapa bagian dari Bab 4 dan banyak bagian dari Bab 5 bersumber dari “The Fruitless Search for a Smoking Gun: Tracing the Origins of Violence in East Timor,” dalam Freek Colombijn dan J. Thomas Lindblad (penyunting), *Roots of Violence in Indonesia*, Leiden: KITLV Press, 2002, halaman 243-276. Pembahasan tentang sejarah milisi dalam Bab 6, walaupun dengan beberapa perbaikan, pada dasarnya diambil dari: “People’s War: Militias in East Timor and Indonesia,” *South East Asia Research*, 9, 3, halaman 271-318. Dalam Bab 10, studi kasus 10.6 dan 10.7 merupakan versi yang sedikit diperbaiki dari laporan internal yang disusun oleh penulis sebagai Pejabat Urusan Politik UNAMET pada 1999. Beberapa bagian dari Bab 12 diambil dari: “If You Leave Us Here, We Will Die,” dalam Nicolaus Mills dan Kira Brunner (penyunting), *The New Killing Fields: Massacre and the Politics of Intervention*, New York: Basic Books, halaman 159-183.

Catatan tentang penulis

Geoffrey Robinson adalah seorang Guru Besar Madya dan Wakil Kepala Urusan Pascasarjana, pada Jurusan Sejarah, University of California, Los Angeles (UCLA). Ia mendapatkan BA dari McGill University dan Ph.D dari Cornell University. Ia menulis *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali* (Cornell University Press, 1995) dan sejumlah tulisan akademis mengenai sejarah dan politik Indonesia dan Timor-Leste. Dalam kurun waktu 1989-1994 ia bekerja pada kantor pusat Amnesty International di London, memimpin penelitian dan menulis sejumlah laporan utama mengenai Indonesia, Timor-Leste, dan Filipina. Sejak Juni sampai November 1999, ia bekerja sebagai Pejabat Urusan Politik pada Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (UNAMET).

Lampiran 2:
Data dan metode statistik

Data dan metode statistik

3255 | Pendahuluan

3255 | Relevansi dari analisis data empiris terhadap mandat Komisi

3257 | Sumber-sumber data

3257 | Human Rights Violations Database (HRVD)

3257 | Proses pengambilan pernyataan oleh Komisi

3259 | Ciri demografis para deponen

3260 | Kemungkinan bias sampel dalam proses pengambilan pernyataan

3261 | Amnesty International

3262 | Fokupers

3262 | Pemberian kode terhadap sumber-sumber kualitatif
(pernyataan naratif CAVR, Amnesty International, dan Fokupers)

3264 | Hasil pengumpulan data HRVD

3265 | Retrospective Mortality Survei (RMS)

3265 | Sampel statistis yang digunakan dalam RMS

3266 | Desain Angket dan pengembangan Retrospective Mortality Survei

3268 | Pelaksanaan survei dan pekerjaan lapangan

3269 | Graveyard Census Database (GCD)

3269 | Pengumpulan data GCD

3270 | Gambaran metodologis tentang teknik-teknik penyuntingan data, pembersihan, dan normalisasi nama

3270 | Pembersihan dan penyuntingan basis data

3271 | Penyuntingan dan pembersihan tanggal

3271 | Penyuntingan dan pembersihan usia

3272 | Penyuntingan dan pembersihan kode-kode pelanggaran dan hubungan

3272 | Penyuntingan dan pembersihan kode lokasi geografis

3272 | Deduplikasi pemakaman dan makam GCD

3273 | Proses pembersihan nama-nama

3274 | Penguraian nama

3275 | Kanonikalisasi nama

3277 | Pengodean jenis kelamin dan etnik

3277 | Konversi data

3278 | Tinjauan pertalian catatan (*record linkage*)

3279 | Aturan-aturan pencocokan

3279 | Pencocokan nama-nama

3280 | Pencocokan jenis kelamin dan etnis

3280 | Pencocokan lokasi

3281 | Mencocokkan tanggal

3281 | Pembatasan tingkat pencatatan

3282 | Pencocokan intra-sistem

3282 | Pencocokan fatal intra-sistem HRVD

3283 | Pencocokan fatal intra-sistem RMS

3283 | Pencocokan nonfatal intra-sistem HRVD

3283 | Penilaian dan pencocokan auto-kanonikalisasi nama nonfatal

3285 | Ulasan pencocokan nonfatal intra-sistem HRVD oleh ahli hubungan data

3286 | Pencocokan Antarsistem

3286 | Tahap 1 – Pencocokan yang Dihasilkan Komputer

3287 | Tahap 2 – Pencocokan dengan bantuan komputer

3287 | Tahap 3 – Pencocokan data yang tidak jelas

3288 | Pencocokan fatal pasangan-baik antarsistem

3290 | Pengolahan data pelanggaran yang dilaporkan melibatkan kelompok-kelompok korban tak dikenal

3291 | Teknik-teknik perkiraan statistik yang digunakan dalam analisis pelanggaran fatal dan pemindahan

3291 | Kalkulasi beban RMS

3293 | Penentuan tanggal RMS untuk analisa pemindahan

3293 | Penyesuaian beban RMS untuk perkiraan angka kematian

3295 | Analisis sensitivitas terhadap asumsi-asumsi dalam pengukuran kembali angka kematian (*mortality re-weighting*)

3296 | *Multiple System Estimation* (MSE): motivasi dan teori

3299 | Mengalokasikan GCD menurut jenis kematian

3300 | Analisis sensitivitas hilangnya pengetahuan sosial: penyesuaian-penyesuaian untuk perkiraan yang terlalu rendah

Daftar tabel:

- 3260** | **Tabel 1** : Pernyataan yang diberikan, relatif terhadap jenis kelamin pemberi pernyataan
- 3264** | **Tabel 2:** Matriks pencatatan perhitungan untuk Basis Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HRVD)
- 3268** | **Tabel 3:** Daftar aldeia yang tidak dihitung dalam pengambilan sampel
- 3274** | **Tabel 4:** Contoh penulisan nama Portugis orang Timor-Leste
- 3274** | **Tabel 5:** Contoh penulisan nama asli orang Timor-Leste
- 3278** | **Tabel 6:** Tabel perhitungan total yang tercatat oleh basis data sebelum dan sesudah pembersihan
- 3288** | **Tabel 7:** Matriks hasil pencocokan antarsistem
- 3289** | **Tabel 8:** Tabel total catatan perhitungan pencocokan antarsistem dan persentase pelanggaran fatal menurut pasangan set data
- 3291** | **Tabel 9:** Tingkat duplikasi di antara korban-kelompok
- 3299** | **Tabel 10:** Tabel perkiraan proporsi kematian, menurut periode dan cara kematian

Daftar grafik:

- 3258** | **Grafik 1:** Jumlah pernyataan yang diberikan, berdasarkan distrik
- 3259** | **Grafik 2:** Jumlah pernyataan, berdasarkan usia dan jenis kelamin pemberi pernyataan
- 3302** | **Grafik 3:** Perkiraan tingkat kematian kasar bagi Timor-Leste
- 3302** | **Grafik 4:** Perkiraan kematian total akibat kelaparan dan penyakit di Timor-Leste (berdasarkan MSE)
- 3303** | **Grafik 5:** Perkiraan kematian total akibat kelaparan dan penyakit di Timor-Leste (berdasarkan RMS)

Lampiran 2:

Data dan metode statistik

Pendahuluan

1. Kejadian menyangkut hak asasi manusia adalah masalah rumit. Seorang saksi mata atau korban bisa melaporkan tentang satu atau beberapa korban, yang masing-masing bisa saja mengalami satu atau banyak pelanggaran. Setiap pelanggaran bisa saja melibatkan satu atau banyak pelaku. Dengan demikian, interaksi antara orang-orang yang berbeda dalam ribuan kejadian sejenis ini mengharuskan adanya metode-metode identifikasi dan agregasi empiris yang cermat untuk mendukung analisis kuantitatif yang valid dan bisa dipercaya.
2. Untuk menjamin kualitas data, Komisi menempuh beberapa proses. Apendiks metodologis ini menyetengahkan data dan metode yang digunakan untuk memperoleh hasil data statistik Komisi.
3. Apendiks ini dibagi dalam enam bagian utama. Bagian 1 menyetengahkan garis besar tentang relevansi dari analisis data empiris terhadap mandat Komisi. Bagian 2 menyetengahkan gambaran terperinci tentang set-set data yang berbeda yang digunakan dalam analisis statistik Komisi. Bagian 3 menggambarkan penyuntingan data, pembersihan, dan teknik normalisasi nama yang diterapkan terhadap data. Bagian 4 menyetengahkan berbagai tabulasi perekaman pada tahapan yang berbeda dari proses konversi data. Bagian 5 menyetengahkan berbagai teknik deduplikasi dan pertalian pencatatan (*record linkage*) yang digunakan untuk mencocokkan laporan-laporan berganda tentang korban perorangan yang sama. Bagian 6 mendokumentasikan proses pengolahan data yang digunakan untuk menerangkan laporan-laporan berganda atas kelompok-kelompok korban yang tidak dikenal. Akhirnya, Bagian 7 menyetengahkan teknik estimasi statistik yang digunakan untuk mendapatkan estimasi total dari magnitudo dan pola pelanggaran dan pemindahan selama periode acuan Komisi.

Relevansi dari analisis data empiris terhadap mandat Komisi

4. Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) membantu Komisi mengumpulkan dan menganalisis data pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan periode mandat Komisi, 1974-1999.^{*} Apendiks ini menjelaskan bagaimana data ditata dan diproses.

^{*} HRDAG adalah sebuah divisi dari Benetech Inc di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Para staf HRDAG termasuk para ahli statistik, pemrogram komputer, dan ahli pencatatan. Para anggota HRDAG telah bekerja dalam proyek-proyek dokumentasi dan analisis hak asasi manusia berskala luas di lima benua, di lebih daripada belasan negara selama 20 tahun terakhir. HRDAG telah bekerja dengan komisi kebenaran resmi di Haiti, Afrika Selatan, Guatemala, Peru, Ghana, dan Sierra Leone; dengan Pengadilan

5. Komisi membutuhkan sebuah sistem manajemen informasi untuk mengatur dan menyusun data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang digarisbawahi dalam mandatnya. Secara khusus, sistem manajemen informasi Komisi harus menyediakan informasi tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang pada gilirannya harus menyediakan:

- Analisis statistik deskriptif tentang pola umum dan kecenderungan pelanggaran supaya dapat menggambarkan “sifat” pelanggaran hak asasi manusia (jenis pelanggaran yang dilakukan).¹
- Proyeksi statistik dari total pelanggaran untuk menetapkan “tingkat” pelanggaran hak asasi manusia (jumlah total pelanggaran yang dilakukan).²
- Hipotesis statistik yang menguji pengulangan pelanggaran tertentu untuk menginvestigasi apakah pola pelanggaran tertentu merupakan “pola pelanggaran yang sistematis”.³
- Analisis pada tingkat kasus dengan pengarsipan dan pencarian basis data untuk menjelaskan “anteseden, keadaan, faktor, konteks, motif, dan perspektif” yang mengakibatkan pelanggaran dalam skala besar.⁴
- Analisis kuantitatif terstruktur dan pengujian hipotesis untuk menyelidiki apakah “pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia merupakan hasil dari perencanaan yang disengaja, kebijakan, atau otorisasi” dari pihak partai tertentu dalam konflik.⁵
- Penjelasan resmi dari metodologi keilmuan dan statistik yang digunakan untuk menunjukkan bahwa temuan-temuan Komisi didasarkan pada “informasi faktual dan obyektif dan bukti-bukti yang dikumpulkan atau diterima oleh Komisi atau diberikan sebagai bantuan”.⁶

6. Komisi menyadari bahwa setelah mengalami pelanggaran hak asasi manusia, banyak korban dan keluarga mereka hidup dalam kebisuan, ketakutan, dan keterasingan, sering lebih daripada 25 tahun lamanya. Karena itu, Komisi harus memikirkan sistem manajemen pengumpulan data dan informasi yang dapat sekaligus menghasilkan data historis yang dapat dipercaya dan memajukan partisipasi publik dalam proses-proses pencarian kebenaran.

Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia; dan dengan kelompok-kelompok hak asasi nonpemerintah di El Salvador, Kamboja, Guatemala, Kolombia, Afghanistan, Sri Lanka, dan Iran. Untuk informasi selanjutnya lihat <http://www.hrdag.org>.

Sumber-sumber data

7. Seksi ini mengetengahkan ciri-ciri dari tiga basis data statistik utama yang dikembangkan oleh Komisi untuk melaksanakan analisis kuantitatif terhadap pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan memajukan rekonsiliasi di Timor-Leste. Human Rights Violations Database (HRVD) adalah kumpulan pernyataan naratif dari para korban, dari laporan kualitatif Amnesty International (AI), dan dari data-data yang dikumpulkan oleh Fokupers, sebuah organisasi nonpemerintah Timor-Leste. Retrospective Mortality Survey (RMS) adalah sebuah sampel acak survei rumahtangga yang digunakan untuk memperkirakan pemindahan dan kematian selama periode mandat Komisi. Basis Data Sensus Makam (Graveyard Census Database, GCD) adalah sebuah sensus menyeluruh tentang perkemahan umum di ke-13 distrik di Timor-Leste.

8. Paduan data dari ketiga aliran data Komisi—HRVD, RMS, dan GCD—digunakan untuk membuat perkiraan demografis independen terhadap keseluruhan tingkat, pola, kecenderungan, dan tingkat pertanggungjawaban terhadap pelanggaran fatal masa lalu di Timor-Leste.

Human Rights Violations Database (HRVD)

9. Bagian berikut ini akan menggambarkan tiga proyek dokumentasi yang dilakukan untuk membentuk Basis Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia dari Komisi. Proses transformasi informasi kualitatif dari proyek-proyek dokumentasi ini ke dalam data statistik juga diketengahkan. Akhirnya, rekaman perhitungan dari ketiga proyek dokumentasi juga diutarakan.

Proses pengambilan pernyataan oleh Komisi

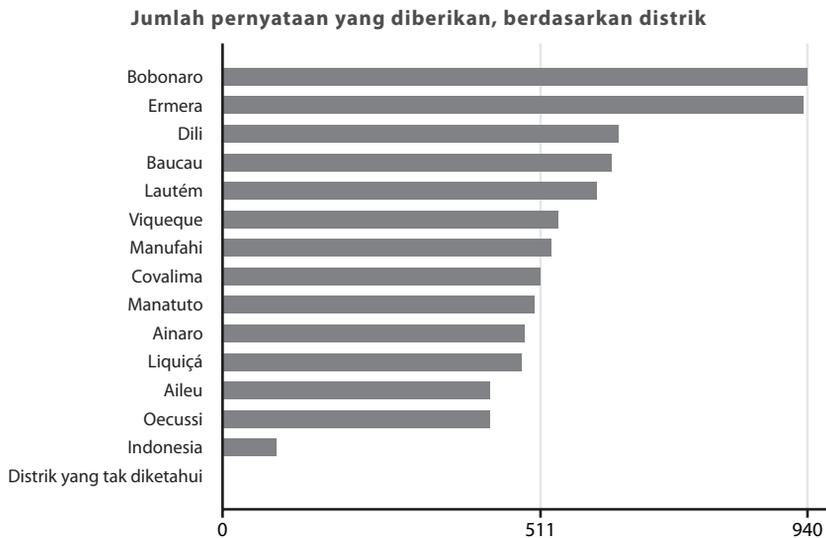
10. Pada Februari 2003, Komisi mulai mengumpulkan pernyataan naratif dari orang-orang di ketigabelas distrik di Timor-Leste dan dari orang-orang Timor-Leste yang saat itu tinggal di Timor Barat. Pernyataan-pernyataan ini adalah dasar dari HRVD. Komisi membuka kantor di ke-13 distrik untuk melaksanakan mandatnya. Secara keseluruhan, ada 7.669 pernyataan naratif yang relevan yang dikumpulkan, yang mendokumentasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan. Pernyataan naratif ini menyediakan informasi baik tentang pelanggaran fatal maupun pelanggaran nonfatal selama periode acuan Komisi.* Proses pengambilan pernyataan meliputi ke-65 subdistrik di ke-13 distrik di Timor-Leste.† Selain pengumpulan

* Tim-tim Komisi mengumpulkan sejumlah 7,824 pernyataan. Beberapa dari pernyataan-pernyataan ini (155 pernyataan) tidak dimasukkan ke dalam HRVD karena tidak menyebutkan pelanggaran yang berhubungan dengan mandat Komisi ataupun pelanggaran yang disebutkan tidak dalam cakupan periode acuan Komisi.

† Tim-tim distrik dari Komisi secara umum bekerja dengan komunitas-komunitas sesuai dengan identifikasi secara lokal terhadap subdistrik, desa, dan *aldeia*. Ketika Komisi memulai pekerjaannya pada awal 2002, jumlah dari subdistrik di Timor-Leste adalah 65; namun, Kantor Statistik Nasional dan Survei Suco Timor-Leste pada 2001 melaporkan 64 subdistrik.

pernyataan di tingkat distrik, Komisi juga mengumpulkan 86 pernyataan dari para pengungsi Timor-Leste dan orang-orang lainnya yang tinggal di Timor Barat, melalui kemitraan Komisi dengan sebuah koalisi dari LSM-LSM yang berbasis di Timor Barat.*

11. Mengingat pemberian pernyataan secara keseluruhan bersifat sukarela dari pihak deponen, dan didasarkan pada suatu pengambilan sampel yang mungkin, persebaran pernyataan di sepanjang lokasi-lokasi geografis tidaklah seragam. Sebagaimana ditunjukkan oleh grafik di bawah ini, Komisi pada dasarnya mengumpulkan lebih banyak pernyataan dari para deponen di Bobonaro dan Ermera daripada di distrik-distrik lain. (Lihat paragraf 18 untuk gambaran terperinci tentang faktor-faktor yang mungkin memengaruhi proses pemilihan sampel selama proses pengambilan pernyataan Komisi.)



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

12. Untuk menganalisis informasi kualitatif ini secara statistik, informasi tersebut dikodifikasi ke dalam sebuah basis data FoxPro dengan menggunakan standar-standar desain dari model data “Siapa Melakukan Apa Terhadap Siapa”.⁷ Meskipun data-data ini menyediakan banyak pengetahuan yang bermanfaat, proses pengambilan pernyataan Komisi yang menghasilkan data-data ini tidak memakai sistem pengambilan sampel acak berbasis kemungkinan (*probability-*

* Koalisi LSM terdiri atas CIS (Center for Internally Displaced Persons Service), Truk-F, Lakmas (Lembaga Advokasi Kekerasan Masyarakat Sipil) Cendana Wangi, Yabiku, dan Yayasan Peduli Indonesia (YPI). Staf dari LSM-LSM ini mengumpulkan pernyataan dari orang-orang Timor-Leste yang tinggal di Belu, Kefamenu, Soe, dan Kupang di Timor Barat antara Februari dan Agustus 2003.

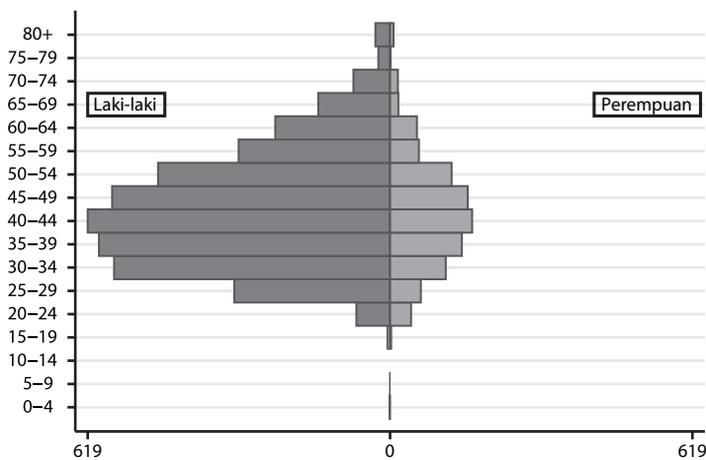
based random sample). Komisi cenderung menerima pernyataan dari mereka yang bersedia merelakan informasi yang bisa mereka ingat. Sebagai hasilnya, data naratif, secara tersendiri, tidak bisa dianggap sebagai data yang secara statistik mewakili keseluruhan tingkat dan pola pelanggaran di Timor-Leste.

Ciri demografis para deponen

13. Sekitar 21,4% (1.642/7.669) dari semua deponen dalam proses pengambilan pernyataan Komisi adalah perempuan. Dalam beberapa komunitas, para perempuan tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi Komisi karena mereka diharapkan tinggal di rumah. Selain itu, hanya sedikit perempuan yang merupakan anggota dari organisasi formal yang memiliki akses kepada informasi menyangkut pekerjaan Komisi, dan sejumlah orang lain ragu atau malu untuk memberikan kesaksian.*

14. Komisi menerima pernyataan dari orang dewasa dari segala usia. Baik laki-laki maupun perempuan, jumlah tertinggi deponen adalah dari kelompok umur 40-44, sebagaimana terlihat dalam bagan di bawah ini.

Jumlah pernyataan, berdasarkan usia dan jenis kelamin pemberi pernyataan



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: 34,6% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

15. Meskipun ada perbedaan mendasar dalam tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan pernyataan Komisi, deponen perempuan cenderung berbicara tentang pelanggaran terhadap diri mereka (ketimbang tentang pelanggaran terhadap orang lain) dalam proporsi yang kurang lebih sama

* CAVR, dokumen internal: Laporan Evaluasi Proses Pengambilan Pernyataan CAVR. Arsip CAVR

dengan deponen laki-laki. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini, dari semua pelanggaran yang dilaporkan oleh perempuan, 30,6% (2.939/9.605) adalah pelanggaran terhadap diri mereka, sementara untuk deponen laki-laki, 35,3% (17.438/49.382) dari pelanggaran yang dilaporkan adalah terhadap diri mereka.

Tabel 1: Pernyataan yang diberikan, relatif terhadap jenis kelamin pemberi pernyataan

| Jenis kelamin deponen | Deponen sama dengan korban | Deponen berbeda dari korban | % (Deponen sama dengan korban) | % (Deponen berbeda dari korban) | Total |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|
| Perempuan | 2939 | 6666 | 30,6 | 69,4 | 9605 |
| Lelaki | 17438 | 31944 | 35,3 | 64,7 | 49382 |
| Tak tercatat | 8 | 979 | 0,8 | 99,2 | 987 |
| | 20385 | 39589 | 34,0 | 66,0 | 59974 |

16. Tantangan sosial, budaya, dan ekonomi yang dihadapi perempuan dapat membatasi partisipasi mereka dalam sosialisasi dan proses pengambilan pernyataan Komisi. Namun, temuan-temuan statistik Komisi sesuai dengan klaim bahwa kebanyakan korban pembunuhan, penghilangan, penyiksaan, dan penganiayaan adalah laki-laki muda. Sebaliknya, mayoritas terbesar pelanggaran seksual yang terdokumentasi oleh Komisi dialami oleh korban perempuan. (Lihat Bagian 6: Profil pelanggaran Hak Asasi Manusia.)

17. Para pengambil pernyataan mewawancarai para deponen dalam bahasa Tetum, bahasa Indonesia, atau bahasa dan dialek Timor-Leste lainnya (yang merupakan bahasa lisan meskipun tidak umum ditulis), kemudian menuliskan teks wawancara dalam bahasa Tetum atau Indonesia. Formulir pengambilan pernyataan tersedia dalam bahasa Tetum dan Indonesia. Dari 7.669 pernyataan yang diterima Komisi dan ditemukan berada dalam mandat Komisi, 81,7% adalah dalam bahasa Tetum, 17,0% dalam bahasa Indonesia, 1,2% dalam bahasa Timor-Leste lainnya, dan 0,1% dalam bahasa yang tidak ditentukan. Karena formulir pengambilan pernyataan Komisi adalah dalam bahasa Tetum dan Indonesia, pernyataan yang diberikan dalam bahasa lain dituliskan oleh pengambil pernyataan ke dalam formulir resmi baik dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Tetum sebelum memasuki tahap kodifikasi, pemasukan data, dan analisis pernyataan naratif.

Kemungkinan bias sampel dalam proses pengambilan pernyataan

18. Sebagaimana dibahas dalam bagian lain dalam lampiran ini, sifat sukarela dari proses pengambilan pernyataan Komisi berujung pada suatu tingkat “seleksi sendiri”. “Seleksi sendiri” ini, pada gilirannya, menimbulkan sejumlah faktor yang memengaruhi siapa saja yang bisa memberikan pernyataan seperti:

- Orang-orang yang tinggal di wilayah terpencil atau pegunungan yang sangat jauh dari pengumpulan data (seperti kota kabupaten) punya kesempatan

lebih kecil untuk menjadi sampel daripada mereka yang lebih dekat ke kota-kota setempat dan ibukota-ibukota distrik

- Orang-orang yang aktif secara sosial dan/atau tangkas secara fisik lebih mungkin memberikan pernyataan daripada mereka yang sakit, orang tua, penyandang cacat, atau yang mempunyai trauma
- Orang-orang yang aktif dalam komunitas setempat atau berhubungan dekat dengan pejabat desa, subdistrik, atau distrik setempat dan para tetua lebih besar kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam proses sosialisasi dan pengambilan pernyataan karena usaha-usaha pengumpulan pernyataan secara lokal sering diatur lewat struktur dan pejabat desa setempat
- Orang-orang yang meninggal sebelum Komisi dibentuk tidak berkesempatan mengungkapkan cerita mereka kepada Komisi; karena itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu cenderung kurang sering dilaporkan ketimbang peristiwa-peristiwa yang lebih kemudian
- Orang-orang dengan akses yang kecil atau tidak punya akses samasekali kepada media dan komunikasi massal lebih kecil kemungkinannya untuk mendekati Komisi, dan
- Orang-orang dari konstituen yang memusuhi Komisi lebih kecil kemungkinannya untuk membuat pernyataan

19. Untuk menjawab masalah bias sampel, Komisi melengkapi proses pengambilan pernyataan dengan kumpulan pernyataan naratif dari Fokupers dan dengan informasi sumber sekunder dari Amnesty International. Selain itu, untuk memperhitungkan bias dalam mengukur pemindahan dan pelanggaran fatal, Komisi mengembangkan Retrospective Mortality Survey (Survei Kematian Retrospektif) yang mengumpulkan informasi terstruktur dari sebuah sampel kemungkinan acak dari berbagai rumah tangga di Timor-Leste. (Lihat seksi di bawah untuk pemaparan yang lebih lengkap dari desain teknik sampling dan instrumen survei yang digunakan untuk Retrospective Mortality Survey).

Amnesty International

20. Amnesty International melaporkan tentang situasi hak asasi manusia Timor-Leste selama periode mandat Komisi sebagian besar dengan cara mengumpulkan informasi melalui jaringan kerja bawahtanah di Timor-Leste dan melalui hubungannya dengan diaspora Timor-Leste di Australia dan Portugal.

21. Komisi menerima 322 laporan dan dokumen dari Amnesty International, yang disusun antara 1975 dan 1999.*

* Komisi tidak berhasil mendapatkan Laporan-laporan Amnesty International berikut ini: ASA 21/12/83 UA 212/83 21 September; ASA 21/16/85 Disappearances; ASA 21/44/85 Unfair Trials and Possible Torture in Timor-Leste; ASA 21/22/87 Statement on ET by AI to the UN Special Committee on Decolonisation; ASA 21/23/87 ET: Releases of Political Prisoners; ASA 21/14/91 AI statement to UN Special Committee on Decolonisation - Appendix I and II; ASA 21/24/91 Timor-Leste: After the massacre - Appendix 1. Sebagai akibatnya, analisis statistik Komisi terhadap pelanggaran-pelanggaran di Timor-Leste yang dilaporkan

22. Laporan kualitatif dan Urgent Actions dari Amnesty International dikodifikasi dan dimasukkan ke dalam Human Rights Violations Database Komisi dengan menggunakan metode dan standar yang sama yang digunakan untuk pernyataan yang dikumpulkan oleh Komisi. Informasi yang dikumpulkan dari Amnesty International menggambarkan situasi umum hak asasi manusia di Timor-Leste, karena hal ini dipantau oleh komunitas hak asasi manusia internasional pada saat itu.

Fokupers

23. Forum Komunikasi untuk Perempuan Loro Sae (Fokupers), sebuah LSM hak asasi manusia setempat, membangun sebuah basis data pelanggaran setelah terjadi serangkaian kekerasan yang berhubungan dengan Konsultasi Rakyat 1999.* Basis data Fokupers dibangun dari wawancara-wawancara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh staf Fokupers dengan perempuan-perempuan Timor-Leste. Semula, tujuan utama dari wawancara itu berkaitan dengan pekerjaan konseling yang dilakukan oleh Fokupers. Namun, tujuan-tujuan itu diperluas dengan memasukkan dokumentasi untuk maksud-maksud penyelidikan oleh otoritas hukum yang kompeten, seperti Unit Kejahatan Berat PBB. Pernyataan-pernyataan naratif diambil dalam bahasa Tetum.

24. Fokupers membangun basis datanya untuk mendukung publikasi laporan tentang kekerasan terhadap perempuan. Basis data asli Fokupers dipusatkan pada menengahkan data biografis para korban, peristiwa-peristiwa naratif yang digambarkan, dan mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi serta pelaku yang terlibat. Pada Juli 2004, Fokupers menyerahkan data-data ini kepada Komisi dalam kesepakatan bahwa identifikasi perorangan dari pelaku, korban, atau anggota keluarga dalam basis data tidak akan dicantumkan dalam Laporan Akhir Komisi. Staf Komisi memberikan kode ulang terhadap data-data tersebut, berdasarkan definisi-definisi terstandar dan skema pengodean Komisi, sehingga data-data ini dapat dianalisis sejalan dengan Basis Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia Komisi (HRVD).

Pemberian kode terhadap sumber-sumber kualitatif (pernyataan naratif CAVR, Amnesty International, dan Fokupers)

25. Pengodean data adalah proses mentransformasi informasi naratif tak berstruktur tentang pelanggaran, korban, dan pelaku ke dalam suatu satuan yang bisa dihitung dari elemen-elemen data, tanpa membuang informasi penting atau menyalahartikan informasi yang terkumpul itu.

.....
oleh Amnesty International tidak mencantumkan tindakan dan insiden terkait yang tercakup dalam laporan-laporan ini.

* Fokupers didirikan pada 1997 untuk mendukung korban kekerasan politik melalui program konseling dan bentuk bantuan lainnya kepada perempuan korban pelanggaran, termasuk mantan tahanan politik, janda perang, dan istri para tahanan politik. Mandat Fokupers juga meliputi memajukan hak asasi perempuan di antara penduduk lokal, terutama perempuan Timor-Leste.

26. Pada Oktober 2003, tim pengolahan data Komisi memeriksa kembali proses pengodean dan pemasukan data untuk mengidentifikasi kesalahan sistematis dan inkonsistensi dalam proses pengodean dan pemasukan data. Pada saat itu, 2.473 pernyataan telah terkodefikasi dan dimasukkan ke dalam basis data Komisi. Sebuah sampel acak atas 15% dari pernyataan (yaitu 371 pernyataan) dalam basis data diambil dan distratifikasi berdasarkan distrik di mana pernyataan tersebut diambil.

27. Setiap pernyataan diterima oleh seorang juru kode: sang pemberi kode mengode kembali pernyataan itu tanpa melihat bagaimana pernyataan itu dikodei sebelumnya. Lalu hasil kedua dibandingkan dengan pengodean sebelumnya dan kesalahan-kesalahan dalam pengodean pertama diidentifikasi, dicatat, dan diperbaiki. Selain itu, juru kode juga memeriksa kembali entri basis data untuk pernyataan ini dan mengidentifikasi dan mencatat jika ada kesalahan dan memperbaikinya.

28. Dari 371 pernyataan yang diperiksa kembali, teridentifikasi 416 kesalahan pengodean. 58% (241/416) dari kesalahan-kesalahan ini adalah kesalahan pengodean pelanggaran, 12% (49/416) kesalahan berhubungan dengan pengodean afiliasi korban, 10% (42/416) berhubungan dengan tingkat kekhususan lokasi yang dikodei, 9% (36/416) berhubungan dengan afiliasi institusional dari pelaku. Dari 416 kesalahan pengodean yang teridentifikasi, 70% (291/416) di antaranya adalah kesalahan tidak-diidentifikasi (yaitu, ketika tindakan tidak diidentifikasi sebagai sebuah pelanggaran atau orang atau lokasi tidak diidentifikasi oleh pemberi kode). 17% (71/416) kesalahan pengodean karena pemberi kode menggolongkan suatu tindakan sebagai sebuah pelanggaran meskipun apa yang digambarkan dalam naratif tidak memenuhi definisi dan kondisi-kondisi pembatasan dari kosakata terkontrol dari Komisi. Akhirnya, 13% (54/416) kesalahan pengodean adalah akibat dari klasifikasi yang salah terhadap suatu tindakan, dengan memasukkannya ke dalam kategori pelanggaran yang salah.

29. Sebagai hasil dari pemeriksaan kembali terhadap pengodean ini, tim pengolah data mengambil tiga langkah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan seperti itu selanjutnya: (1) sejumlah revisi dilakukan terhadap kosakata terkontrol dari Komisi; (2) diadakan sebuah lokakarya di mana hasil pemeriksaan kembali itu diketengahkan kepada tim pengodean dan pelatihan lebih lanjut dilakukan dalam hal-hal yang diperlukan; dan (3) dilaksanakannya latihan penulisan kode dalam kelompok reguler di mana para pemberi kode mengode pernyataan yang sama dan memeriksa kembali konsistensi dari pilihan pengodean mereka dengan menggunakan ulasan kualitatif maupun pengukuran Inter-Rater Reliability (IRR) kuantitatif.*

30. Jenis-jenis revisi utama yang dilakukan terhadap kosakata terkontrol Komisi adalah:
- Pengurangan dalam kategori pelanggaran menjadi sebuah daftar yang lebih dapat diatur
 - Penghalusan atas kondisi-kondisi yang membatasi dari kategori pelanggaran yang secara konseptual serupa (seperti penyiksaan dan penganiayaan)

* Inter-Rater Reliability adalah tingkatan di mana dua atau lebih pemberi kode setuju. Inter-Rater Reliability menjawab persoalan konsistensi dari implementasi dari sebuah sistem pengodean.

- Memusatkan kembali kosakata terkontrol hanya kepada pengukuran pelanggaran, tidak lagi baik untuk pengukuran pelanggaran maupun dampak fisik dan psikologis dari pelanggaran-pelanggaran ini
- Menyederhanakan definisi-definisi kategori pelanggaran dan menjamin sintaksis dari definisi tersebut lebih konsisten dengan kekhususan informasi yang dikumpulkan di dalam pernyataan-pernyataan (sebagai contoh, istilah-istilah teknis hukum dibahasakan ke dalam bahasa umum atau dihilangkan, karena istilah-istilah itu tidak sesuai dengan kenyataan historis yang diukur)
- Revisi terhadap daftar aktor-aktor institusional; baik penyederhanaan daftar itu maupun penyusunan hierarkis institusi-institusi yang mencerminkan hubungan struktural di antara institusi-institusi tersebut.

Hasil pengumpulan data HRVD

31. Kombinasi tiga sumber data HRVD menghasilkan sebuah basis data dengan pencatatan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Pencatatan ini menengahkan korban-korban perorangan dan kelompok, baik yang menderita pelanggaran fatal maupun nonfatal. Tabel ini menunjukkan perincian jumlah pencatatan yang dikumpulkan dalam setiap basis data. Perhatikan bahwa angka-angka mewakili total data sebelum dilakukan pembersihan, di mana pencatatan yang invalid dan berganda dikeluarkan dari basis data.

| | Jumlah pernyataan | Jumlah satuan | Pelanggaran fatal | Pelanggaran nonfatal |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Pernyataan CAVR | 7779 | 38812 | 6778 | 31595 |
| Amnesty International | 267 | 547 | 122 | 631 |
| Fokupers | 423 | 4888 | 376 | 3983 |
| Total | 8.469 | 4.4247 | 7.276 | 36.209 |

32. Kelompok merupakan catatan tentang korban tak bernama yang mengidentifikasi dua atau lebih korban. Sejumlah korban mengalami pelanggaran nonfatal yang berganda, yang lainnya mengalami hanya satu pelanggaran fatal. Karena itu, total pelanggaran tidak sama dengan jumlah korban.

Retrospective Mortality Survei (RMS)

33. Komisi melakukan sebuah Retrospective Mortality Survei (RMS) untuk menyediakan sebuah perkiraan berbasis kemungkinan terhadap pemindahan dan kematian. Survei ini menarik sebuah sampel acak bertingkat dari rumahtangga, dan menggunakan angket terstruktur untuk mengumpulkan informasi tentang kematian dalam keluarga dan kejadian pemindahan selama periode acuan Komisi. Survei ini memungkinkan perkiraan statistik terhadap tingkatan kematian secara alami, kematian yang berhubungan dengan kelaparan, kematian yang berhubungan dengan konflik, dan perpindahan.

Sampel statistis yang digunakan dalam RMS

34. Sampel RMS didasarkan pada dua tahapan penyusunan sampel. Tahapan pertama adalah sebuah sampel dari 2.336 *aldeia* di Timor-Leste, dan tahapan kedua adalah sampel dari rumahtangga dalam *aldeia-aldeia* terpilih.*

35. Populasi dari rumahtangga ditingkatkan menurut variabel-variabel berikut ini: kota/desa, lokasi distrik, dan tingginya populasi.† Metode stratifikasi implisit digunakan sehingga daftar *aldeia* disortir berdasarkan tingkatan variabel-variabel berikut ini: kota/desa, distrik, dan ketinggian dari permukaan laut, dan sebuah sampel acak sistematis memilih *aldeia-aldeia* di setiap variabel-variabel terstratifikasi.‡ Sebuah pengukuran kumulatif dari besarnya variabel diciptakan dan sebuah sampel interval dikalkulasi sebagai jumlah kluster (144) dibagi dengan total pengukuran besarnya (180.015), yang setara dengan 1.250,1. Sekumpulan angka acak antara 1 dan 1.250,1 diambil (397,235) dan *aldeia* dengan pengukuran kumulatif dari besaran di atas jumlah itu dipilih sebagai sampel. 1250,1 ditambahkan secara berulang ke angka awal yang dibangun secara acak dan *aldeia* diseleksi dari sepanjang daftar itu dalam cara yang sama.

* *Aldeia* adalah unit administratif terkecil di Timor-Leste. Umumnya, sebuah *aldeia* adalah sebuah perkampungan dari sekelompok rumah di sebuah wilayah setempat. Biasanya, sebuah *suco* (desa) terdiri atas tiga atau empat *aldeia*, dan sekelompok *suco* membentuk satu subdistrik yang merupakan bagian administratif dari sebuah distrik. Menurut Survei Suco Timor-Leste 2001 terdapat 13 distrik, 64 subdistrik, 498 *suco*, dan 2.336 *aldeia* di Timor-Leste. Tim distrik Komisi umumnya bekerja di seluruh 65 wilayah yang dianggap berbagai komunitas sebagai subdistrik, karena batas-batas administratif membutuhkan waktu untuk ditata kembali menyusul berakhirnya pendudukan.

† Stratifikasi adalah proses pengelompokan anggota populasi ke dalam subkelompok yang relatif homogen sebelum dilakukan pengambilan sampel. Strata ini perlu terpisah (eksklusif) satu sama lain sehingga setiap unsur dalam populasi hanya dapat dimasukkan ke dalam satu stratum. Strata tersebut juga harus lengkap secara kolektif, di mana tidak boleh ada unsur populasi yang diabaikan. Sampel acak dengan demikian diterapkan pada setiap stratum. Sampel acakbertingkat sering meningkatkan keterwakilan sampel dengan mengurangi kesalahan pengambilan sampel.

‡ Komisi menggunakan sebuah metode yang dikenal sebagai Kemungkinan Proporsional terhadap Besaran [*Probability Proportional to Size*] (dalam hal ini 'besaran' atau 'size' menunjuk kepada jumlah rumahtangga dan bukan menunjuk kepada populasi, meskipun keduanya jelas saling berhubungan). Metode tersebut merupakan rancangan umum dalam survei jenis ini.

36. Keputusan untuk menarik sebuah angka pasti dari 20 rumahtangga, ketimbang suatu angka yang proporsional terhadap besaran *aldeia* atau metode alokasi yang lain, terutama merupakan pertimbangan operasional. Menyeleksi sebuah jumlah pasti dari rumahtangga per *aldeia* adalah salah satu cara untuk menjaga kontrol atas keseluruhan besaran sampel dan agar mempunyai sebuah perkiraan penyebaran beban kerja yang sama di antara para pewawancara.

37. Komisi mempertimbangkan kelayakan menggabungkan responden Timor-Leste yang masih mengungsi di Timor Barat ke dalam populasi acuan.* Namun, keprihatinan atas keamanan, aspek operasional, dan kualitas data yang muncul dari kondisi di Timor Barat menyulitkan pelaksanaan survei di sana. Karena itu, populasi acuan yang disampelkan oleh Komisi terdiri atas semua rumahtangga dalam ketigabelas distrik di Timor-Leste.

38. Adalah tidak optimal, baik karena alasan-alasan statistik maupun operasional, untuk membolehkan *aldeia-aldeia* yang mempunyai kurang daripada 20 rumahtangga untuk disampelkan. Karena itu, *aldeia* yang kecil digabungkan dengan *aldeia* di sekitarnya (yang tidak selalu harus berdekatan atau berbatasan), sebelum pengambilan sampel dilakukan, sehingga perkiraan jumlah rumahtangga dalam sebuah kluster (diartikan sebagai sebuah *aldeia* atau sekelompok *aldeia*) sekurang-kurangnya adalah 40, untuk mengurangi kemungkinan bahwa sebuah kluster sampel mempunyai kurang daripada 20 rumahtangga. Dalam kenyataan, karena ketidakakuratan dari kerangka ini, setibanya di sebuah *aldeia*, sebuah tim lapangan bisa saja menemukan bahwa *aldeia* itu mempunyai kurang daripada 20 rumahtangga, baik karena jumlah rumahtangga yang dilaporkan dalam sensus tahun 1990 tidak akurat, maupun karena telah terjadi perubahan dalam tahun-tahun antara. Karena alasan ini ke 144 kluster *aldeia* sampel sebenarnya terdiri atas 165 *aldeia*. Secara operasional, ini berarti bahwa dalam kluster-kluster ini, para pewawancara harus menarik sampel acak 20 rumahtangga dari antara gabungan jumlah total rumahtangga dalam kluster itu.

Desain Angket dan pengembangan Retrospective Mortality Survei

39. Angket RMS dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut:

- Untuk menghasilkan perkiraan total kematian di Timor-Leste antara 1974 dan 1999, dengan menggunakan baik teknik-teknik perkiraan berbasis survei dan teknik-teknik Perkiraan Sistem Berganda (*Multiple Systems Estimation*), dan
- Untuk mengembangkan analisis berbasis survei yang memperkirakan dan menggambarkan gerakan perpindahan yang rumit di Timor-Leste sepanjang periode mandat Komisi.

* Seksi 3.3 Regulasi 2001/10 menyatakan: "Komisi dapat melaksanakan semua kegiatan yang konsisten dengan pemenuhan mandatnya dalam Regulasi saat ini."

40. Sebagai hasilnya, angket itu ditata dalam modul-modul berikut ini:

- Sebuah register/daftar rumahtangga
- Sebuah daftar perpindahan kepala rumahtangga
- Sebuah riwayat kelahiran perempuan dewasa
- Sebuah riwayat saudara kandung laki-laki/perempuan dewasa
- Sebuah riwayat pengasuhan laki-laki/perempuan dewasa
- Sebuah seksi umum pelanggaran hak asasi manusia

41. Angket ini¹ diulas oleh tiga ahli statistik hak asasi manusia yang bukan merupakan bagian dari Komisi[†] dan beberapa orang spesialis di Komisi. Melalui proses ulasan ini, perbaikan dilakukan terhadap tampilan dan rancangan angket, dan sejumlah masalah peristilahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Tetum diidentifikasi.

42. Satu paket yang terdiri atas delapan wawancara kognitif dilaksanakan selama tahap pengembangan angket itu. Wawancara kognitif ini bertujuan menelaah proses kognitif responden. Wawancara ini mencoba mengidentifikasi kesulitan dan kemungkinan jalan keluar terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh responden dalam (i) pemahaman terhadap pertanyaan, (ii) mengingat kembali informasi yang relevan, (iii) proses-proses keputusan, dan (iv) proses-proses tanggapan.[‡] Sebanyak delapan orang—empat dalam kondisi kerja dan empat di lapangan—berpartisipasi dalam wawancara kognitif ini. Pengertian berharga diperoleh dari penyelidikan terhadap ingatan responden terhadap tanggal. Secara khusus, proses dan tanggapan kognitif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan waktu dan tanggal menunjukkan bahwa sering, ketika seorang responden menjawab “Tidak Tahu”, mereka mungkin hanya tidak mengetahui tanggal yang pasti menurut kalender Gregorian. Namun, tanggapan mereka menunjukkan bahwa sering waktu dari berbagai peristiwa lebih mudah diingat dengan merujuk kepada penanda waktu yang lain seperti peristiwa-peristiwa besar lainnya, atau titik tertentu dalam siklus pertanian atau musim.

43. Dari proses wawancara kognitif, kami mengembangkan pemeriksaan tanggal terstruktur yang meminta responden menyempitkan tanggal kejadian ke dalam sebuah “masa enam-bulan” di mana dapat ditentukan peristiwa-peristiwa besar seperti hari libur, atau petunjuk alam atau fisik (tingginya tanaman jagung atau tanaman lainnya, musim hujan atau musim kering). Proses wawancara kognitif ini juga menunjukkan bahwa konsep waktu seperti ‘awal’, ‘pertengahan’ dan ‘akhir’ tidak dimengerti oleh semua responden, sehingga penyempitan jendela waktu lebih lanjut tidaklah mungkin.

.....
* Lihat angket survei dalam Apendiks dari Annex ini.

† Fritz Scheuren, Presiden Asosiasi Statistik Amerika (American Statistical Association), konsultan untuk HRDAG dalam proyek untuk Kosovo, Guatemala, dan Peru; William Seltzer, Fordham University; dan Jana Asher, penulis pendamping laporan HRDAG di Kosovo, Sierra Leone, dan Peru.

‡ Tourangeau 1984

44. Selama wawancara kognitif dan tes lapangan, responden sering hanya menjawab “tidak tahu” atau “ke gunung/hutan” sebagai tempat ke mana mereka mengunjungi. Sebagai hasil wawancara kognitif, satu seri pemeriksaan yang teliti dibuat untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci tentang tempat di mana orang-orang mengunjungi.

45. Setelah ulasan di antara sesama staf Komisi dan proses wawancara kognitif, angket final kemudian diterjemahkan serta diterjemahkan-balik ke dalam bahasa Indonesia dan Tetum. Angket tersebut kemudian diuji di lapangan selama lima hari di *aldeia-aldeia* di Dili, yang bukan merupakan bagian dari sampel. Sebagai hasil tes lapangan ini, dibuat sejumlah kecil perbaikan pertanyaan berturutan, serta ketatabahasaan dan sintaksis.

Pelaksanaan survei dan pekerjaan lapangan

46. Dalam setiap rumahtangga sampel, kepala rumahtangga menanggapi baik registrasi rumahtangga (dalam mana semua penghuni rumah dicatat) maupun seksi perpindahan. Seorang laki-laki dewasa kemudian secara acak menyeleksi dari populasi perempuan dewasa dari rumahtangga itu untuk menjawab modul riwayat kelahiran perempuan dewasa.

47. Sebelum meninggalkan setiap *aldeia*, semua angket diperiksa oleh penyelia lapangan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki jika ada kesalahan dan inkonsistensi dalam angket yang sudah dilengkapi. Dua koordinator lapangan mendampingi tim yang terdiri atas 22 enumerator (penghitung) survei ke lapangan.

48. Dua belas *aldeia* yang dimasukkan dalam sampel tidak dapat dikunjungi oleh tim penghitung. Tim ini tidak dapat melakukan wawancara di ke-12 *aldeia* ini mengingat masalah keamanan pada saat itu. Tabel di bawah mendaftarkan 12 *aldeia* yang tidak dihitung.

Tabel 3: Daftar *aldeia* yang tidak dihitung dalam pengambilan sampel

| Distrik | Subdistrik | Suco | <i>Aldeia</i> |
|----------|------------|----------|---------------|
| Alieu | Remexio | Liurai | Coto Mori |
| Baucau | Fatumaca | Samalari | Oso Luga |
| Baucau | Laga | Samalari | Soru Gua |
| Bobonaro | Atabae | Atabae | Heleso |
| Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Tapo |
| Covalima | Fohorem | Datorua | Fatulidun |
| Lautém | Iliomar | Ailebere | Heitali |
| Lautém | Lospalos | Fuiluro | Kuluhun |
| Liquiça | Bazartete | Fahilebo | Fatu Neso |
| Oecusse | Passabe | Abani | Na Nos |
| Viqueque | Ossu | Uaibobo | Sogau |
| Viqueque | Uatu-Lari | Matahoi | Loko Loko |

49. Selain itu, di beberapa *aldeia* kurang daripada 10 rumahtangga dapat dihitung, mengakibatkan sejumlah ketiadaan tanggapan (*non-response*) tambahan. Secara keseluruhan, dari 1.440 rumahtangga dalam kerangka sampel, terdapat 3,1% (44/1.440) angka *non-response*. Karena rendahnya angka *non-response*, tidak ada pertalian statistik nyata yang harus dilakukan untuk mengontrol *non-response* dalam survei ini.

Graveyard Census Database (GCD)

50. Untuk membangun data kematian dasar untuk Timor-Leste, Komisi melakukan sensus terhadap pemakaman umum di ke-13 distrik di Timor-Leste. Melalui proses ini, informasi yang tersedia tentang nama, tanggal kelahiran, tanggal kematian, dan agama dikumpulkan. Batu nisan yang tidak mempunyai informasi sejenis ini juga dihitung dan ukurannya dicatat.* Dengan mengumpulkan informasi ini, Komisi menciptakan sebuah sistem registrasi vital *de facto* bagi populasi penduduk Timor-Leste. Dengan kata lain, GCD membuat daftar dasar atas beberapa—atau mungkin hampir semua—kematian, yang dapat digunakan untuk analisis kematian di luar proyek ini.

Pengumpulan data GCD

51. Untuk membantu sensus Komisi atas pemakaman umum di Timor-Leste, daftar pemakaman umum yang diketahui di Timor-Leste dilengkapi oleh staf lapangan CAVR atas konsultasi dengan para pejabat setingkat desa (*suco*), dan jika memungkinkan di tingkat *aldeia*. Sebuah 'pemakaman umum' dalam penelitian ini diartikan sebagai sebuah lokasi yang disediakan secara khusus untuk pemakaman orang yang meninggal. Pengertian ini meliputi tempat pemakaman bersama yang berada di tanah milik umum atau tanah yang dimiliki oleh lembaga agama. Namun, tidak termasuk pemakaman keluarga yang bertempat di tanah milik pribadi.

52. Data GCD dikumpulkan oleh dua tim pengumpul data yang berbeda. Tim pertama mengumpulkan 128.751 catatan dari 803 kuburan, yang dimasukkan ke dalam serangkaian program pengolahan data Excel. Tim pertama meliputi bagian-bagian dari ke-13 distrik, namun hanya Dili yang diliput secara lengkap. Tim kedua menjangkau semua distrik, kecuali Dili, untuk menyelesaikan sensus ini. Mereka mengumpulkan 153.057 catatan tambahan dari 1.779 kuburan. Tim kedua menggunakan program basis data FoxPro untuk memasukkan data mereka.

53. Tim pencatat Komisi mendokumentasikan semua batu nisan dalam pemakaman umum—baik yang ditandai maupun yang tidak ditandai. Kuburan yang bertanda adalah kuburan yang mempunyai struktur fisik yang mengenang kehidupan seseorang, dengan tulisan yang dapat dibaca dalam bahasa Inggris, Indonesia,

* Ukuran batu nisan tak mengandung informasi itu dapat digunakan sebagai sebuah indikator terdekat apakah orang yang meninggal itu anak-anak atau dewasa.

Tetum, maupun Portugis.* Pada semua batu nisan bertanda yang dapat dihitung, informasi berikut ini diberi kode jika terdapat dalam batu nisan: nama lengkap, tanggal lahir, dan tanggal mati. Batu nisan tak bernama biasa berupa salib kecil sederhana atau tanda penguburan yang lainnya, tanpa nama atau informasi tentang tanggal kematian. Para penghitung diminta mencatat informasi tentang agama, jenis bahan, dan ukuran kuburan, jika informasi tersebut dapat dilihat dari batu nisan, baik untuk batu nisan yang bernama maupun yang tidak bernama.

Gambaran metodologis tentang teknik-teknik penyuntingan data, pembersihan, dan normalisasi nama

54. Ketiga basis data yang digunakan oleh Komisi mengharuskan teknik-teknik penyuntingan data, pembersihan, dan normalisasi nama agar data-data tersebut bisa dibandingkan dan dikaitkan di antara basis-basis data itu. Beberapa bulan dihabiskan untuk memeriksa kembali data-data ini atas kesalahan pengetikan atau pengejaan yang nyata, dan sebuah sampel acak pemeriksaan kembali dilakukan untuk menjamin akurasi data. Masalah teknis muncul dalam pengalihan data dari struktur satu basis data ke basis data yang lain, dan hal tersebut juga diidentifikasi dan diperbaiki.

Pembersihan dan penyuntingan basis data

55. Tim pengolahan data melakukan sebuah pemeriksaan lengkap (dan perbaikan di mana perlu) terhadap semua catatan HRVD menyangkut:

- Informasi yang hilang menyangkut distrik/subdistrik
- Informasi tanggal pelanggaran yang tidak masuk akal (misalnya hari = 42, bulan = 13)
- Catatan di mana pelanggaran terjadi sebelum tanggal lahir korban
- Catatan di mana pelanggaran terjadi setelah tanggal mati korban
- Pernyataan di mana deponen dikodei sebagai korban pelanggaran fatal
- Catatan di mana usia korban dikodei sebagai 0 atau dengan angka negatif
- Catatan di mana usia korban dikodei sebagai lebih daripada 75 tahun
- Catatan di mana tidak ada kode pelanggaran yang tercatat
- Catatan di mana tidak ada korban yang tercatat untuk sebuah pelanggaran terkode
- Catatan di mana tidak ada pelaku (individual/institusional) ditetapkan dalam sebuah pelanggaran terkode

* Karena kurangnya sumber, Komisi tidak dapat menghitung pemakaman Cina.

56. Selain pemeriksaan kembali secara menyeluruh dan cepat sebagaimana digambarkan di atas, tim pengodean juga memeriksa sampel acak sederhana dari catatan-catatan tentang pelanggaran fatal, penahanan, penyiksaan, penganiayaan, perekrutan paksa, pelanggaran berbasis seksual, dan pemindahan. Maksud dari pemeriksaan secara cepat ini adalah untuk mengidentifikasi apakah ada kesalahan sistematis dalam afiliasi dari para korban dan tanggung jawab pelaku institusional. Satu inkonsistensi utama teridentifikasi—antara lain di mana afiliasi korban tidak diberikan untuk semua korban dari satu pelanggaran atau beberapa pelanggaran yang terjadi dalam tindakan yang sama atau tindakan-tindakan yang berkaitan erat dalam hal waktu. Catatan-catatan ini diidentifikasi, dan aturan yang memadai diberlakukan untuk memberikan afiliasi korban secara benar di seluruh pelanggaran dalam tindakan yang sama atau aksi terdekat dari aktor yang sama.

Penyuntingan dan pembersihan tanggal

57. Catatan yang jelas mempunyai kesalahan, seperti tanggal lahir, pelanggaran, atau kematian yang baru diakibatkan kemudian, diteliti dan dibetulkan. Hal ini terutama biasa terjadi dalam basis data GCD di mana penanda kuburan sangat kecil sehingga empat digit lengkap dari tahun tidak dapat dituliskan. Sistem pemasukan data tidak bisa menerima penanggalan tahun dengan dua digit, yang seharusnya seperti dalam 1900-an, sebagaimana juga dalam 2000-an. Para pencatat dari tim yang berbeda kadang menggunakan standar pengodean tanggal yang berbeda. Ada yang menggunakan standar Eropa HH-BB-TTTT, ada yang menggunakan standar Amerika Serikat BB-HH-TTTT, ada yang menggunakan format TTTT-BB-HH, atau variasi dari standar-standar ini dengan menggunakan tahun dua digit. Lagipula, kadang tanda pemisah yang berbeda digunakan di antara tahun, bulan, dan hari—antara lain '/', '.', dan '-'. Sebagai akibatnya, semua format penanggalan di sepanjang ketiga set data ini dipetakan ke dalam format terstandar, TTTTBBHH.

58. Jika Tanggal Lahir (TL) berada setelah Tanggal Mati (TM), tanggal-tanggal ini dipertukarkan. Dua jenis kesalahan yang menyebabkan penamaan bulan lebih daripada 12 atau penamaan hari lebih daripada 31 juga diidentifikasi dan diteliti. Komisi melihat bahwa beberapa kesalahan disebabkan oleh variasi setting format penanggalan pada komputer tempat data-data dimasukkan.

59. Kesalahan lain hanyalah kesalahan pengetikan. Catatan dari HRVD dan RMS diperbaiki dengan memeriksa kembali bahan-bahan catatan asli dan memasukkan perbaikan ke basis data. Untuk basis data GCD tidak cukup waktu untuk memeriksa kembali secara manual sumber-sumber itu, sehingga jika kesalahan tidak mudah dibetulkan, nilai dalam bidang penanggalan itu (bulan atau hari) dibiarkan kosong.

Penyuntingan dan pembersihan usia

60. Data usia diperiksa atas kemungkinan kesalahan pengetikan, sebagai contoh, orang-orang dengan usia di atas 100 tahun. Sumber dari pencatatan ini diperiksa kembali untuk memverifikasi data dan perbaikan dilakukan bilamana perlu.

Jika Tanggal Lahir dan Tanggal Mati diketahui, usia ditetapkan. Nilai usia GCD dikalkulasi dan sebuah bidang penanggalan yang baru dibangun untuk membantu memudahkan pencocokan.

Penyuntingan dan pembersihan kode-kode pelanggaran dan hubungan

61. Pemeriksaan kembali dilakukan terhadap kode pelanggaran dan kode hubungan dalam HRVD dan kode RMS yang teridentifikasi tidak valid atau bertentangan dengan data lain dalam sebuah catatan tertentu (sebagai contoh, seorang perempuan dikodei sebagai ayah). Kertas berkas-berkas sumber untuk pencatatan-pencatatan ini diperiksa kembali dan perbaikan dilakukan terhadap basis data.

Penyuntingan dan pembersihan kode lokasi geografis

62. Data lokasi geografis untuk basis data RMS dan HRVD dikodei sesuai standar geokode Timor-Leste yang ditetapkan oleh pemerintah dan disetujui untuk digunakan oleh Komisi. Lokasi-lokasi dibagi dalam empat tingkat administratif—Distrik, Subdistrik, *Suco* (Desa), dan *Aldeia*. Untuk lokasi yang berada di luar Timor-Leste, kode untuk Timor Barat dan Jawa diciptakan dan jika lokasi tidak diketahui, lokasi-lokasi itu ditandai untuk kode yang terpisah untuk tempat yang tidak diketahui. Setiap perkuburan diberikan sebuah kode khusus yang disebut 'id', untuk membedakan antara berbagai perkuburan dalam wilayah geografis yang sama

63. GCD tidak dikumpulkan menurut standar kode geografis Timor-Leste, sehingga diterjemahkan ke dalam kode-kode standar.

Deduplikasi pemakaman dan makam GCD

64. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya penggandaan pencatatan terhadap kuburan dan perkuburan dalam basis data.

- Tim pengumpulan data yang berbeda secara kurang hati-hati melakukan pencatatan terhadap perkuburan yang sama. Banyak perkuburan tidak mempunyai papan nama penunjuk, menyebabkan sulit untuk mengidentifikasi catatan berganda hanya dengan nama mengacu kepada nama perkuburan.
- Lokasi *suco* (desa) dan *aldeia* tertentu sering sangat sulit ditentukan dalam beberapa wilayah pedalaman. Bahkan jika perkuburan mempunyai nama yang sama, bisa saja dikodei ke dalam lokasi geografis yang berbeda. Tambahan lagi, banyak perkuburan mempunyai nama yang sama (Santa Cruz adalah nama yang paling umum), yang berarti bahwa nama perkuburan saja tidak cukup untuk menentukan perkuburan yang digandakan dalam pengodean untuk kode geografis yang berbeda.

- Banyak perkuburan di Timor-Leste tidak ditata secara linear. Hal ini kadang menyebabkan tim pencatat melewati batu nisan yang sama, dan mencatatnya lebih daripada satu kali.
- Karena sangat banyaknya jumlah berkas-berkas kertas yang dibutuhkan untuk mengumpulkan semua data ini, ada kemungkinan duplikasi pemasukan data.

65. Adalah mungkin untuk menemukan keterkaitan antara id perkuburan dengan mengamati nama orang yang meninggal, lokasi perkuburan, nama perkuburan, dan tanggal lahir dan tanggal kematian yang lengkap setelah dicocokkan.* Ketika jejeran duplikasi ditemukan, salah satu perkuburan dikeluarkan dari set data yang digunakan untuk analisis. Walaupun banyak orang mempunyai nama depan dan nama belakang yang sama, dan kemungkinan kesamaan tanggal kematian, kemungkinannya kecil sekali untuk mereka mempunyai tanggal lahir dan tanggal mati yang sama. Oleh karena itu, setiap pencatatan yang mengandung nama depan, nama belakang, tanggal lahir, dan tanggal mati yang sama dianggap sebagai penggandaan, dan hanya satu pencatatan yang dipertahankan dalam basis data untuk analisis.

66. Tujuan dari proses deduplikasi GCD adalah untuk menjamin bahwa orang yang mati hanya dihitung sekali. Telah dipikirkan sejak awal bahwa selama pemindahan paksa orang-orang dapat semula dikuburkan di tempat mereka meninggal, kemudian jenazah diambil oleh sanak keluarganya dan dikuburkan kembali di perkuburan di *aldeia* asal mereka. Juga dipikirkan bahwa jika jenazah tidak ditemukan, sebuah tanda peringatan di perkuburan setempat dapat saja dibangun atau dipasang. Meskipun hal ini mungkin saja terjadi, pemeriksaan kembali secara teliti terhadap data tidak mengungkapkan bahwa penguburan kembali atau penandaan terhadap jenazah yang tidak ditemukan dengan sebuah batu peringatan merupakan praktik umum. Lagipula, ketika jenazah telah ditemukan, penanda pertama akan disingkirkan atau ditempatkan bersama-sama dengan jenazah, dengan demikian mencegah perhitungan berulang. Orang-orang mati yang tidak pernah dikuburkan atau yang tidak dikuburkan di perkuburan umum, tidak termasuk dalam GCD. Untuk dapat menghitung orang mati yang tidak termasuk dalam kesaksian HRVD, wawancara RMS, dan data kuburan GCD, kami melakukan perkiraan sistem berganda terhadap total kematian. Analisis ini dijelaskan di bawah

Proses pembersihan nama-nama

67. Nama orang-orang dalam data Komisi perlu ditangani dalam dua cara. Pertama, nama-nama tersebut perlu diuraikan dalam tiga kategori nama—depan, tengah/kecil, dan belakang. Setelah tahap ini selesai, kanonikalisasi nama diperlukan untuk membantu pertalian catatan. Kanonikalisasi adalah sebuah proses mereduksi setiap nama ke dalam kemungkinan bentuk yang paling sederhana dan paling signifikan, tanpa kehilangan keumumannya.

* Sebuah pencatatan yang lengkap adalah pencatatan yang mempunyai hari, bulan, dan tahun, baik untuk Tanggal Lahir maupun untuk Tanggal Mati.

68. Nama-nama orang mengandung sejumlah variasi yang penting dalam pengejaan, dalam pembagian ke dalam tiga bidang nama dan dalam tanda baca. Variasi nama mempunyai banyak alasan. Dalam pernyataan-pernyataan naratif bersifat terbuka, seperti HRVD, deponen bisa saja merupakan keluarga dekat, teman, tetangga, atau kenalan jauh dari korban, dan dia bisa saja tahu atau tidak tahu bagaimana mengeja nama dari korban yang dilaporkan. Transkripsi oleh pengambil pernyataan dapat saja memberlakukan aturan ejaan dan tanda baca tambahan dan bahkan memasukan ejaan yang salah. Demikian juga perubahan ejaan dan tanda baca dapat terjadi pada tahap pengodean data dan pemasukan data

Penguraian nama

69. Untuk menjawab variasi penting dalam bagaimana nama-nama dibagi ke dalam tiga bidang nama; depan, belakang, tengah/kecil, nama-nama itu diuraikan menurut aturan yang ketat. HRDAG memutuskan membagi nama-nama dengan menggunakan nama depan yang 'pertama' untuk *depan*, dan nama belakang yang paling 'belakang' sebagai *belakang*, kemudian semua nama yang lain dimasukkan ke dalam bidang nama *tengah/kecil*. Selain itu preposisi (contohnya, de, da, do, dos) dikeluarkan dari bidang nama karena penggunaan dari preposisi ini tidak konsisten dalam data.

70. Sebagai contoh, nama Portugis Maria Luisa da Costa da Silva dapat dimasukkan ke dalam basis data sebagai:

Tabel 4: Contoh penulisan nama Portugis orang Timor-Leste

| Nama Depan | Nama Tengah/nama kecil | Nama Belakang |
|-------------|------------------------|-------------------|
| MARIA LUISA | | DA COSTA DA SILVA |
| MARIA | LUISA | DA COSTA DA SILVA |
| MARIA LUISA | DA COSTA | DA SILVA |
| MARIA | LUISA DA COSTA | DA SILVA |
| MARIA LUISA | | SILVA |

71. Proses penempatan nama akan menstandarisasi nama-nama ini, sehingga nama depan adalah Maria sementara nama belakang hanyalah Silva. Semua nama yang lain, tanpa preposisi, dipindahkan ke bidang nama tengah/nama kecil.

72. Nama asli Timor-Leste Mau Bere dapat dimasukkan sebagai:

Tabel 5: Contoh penulisan nama asli orang Timor-Leste

| Nama depan | Nama tengah/nama kecil | Nama belakang |
|------------|------------------------|---------------|
| MAU BERE | | |
| MAUBERE | | |
| MAU | | BERE |
| | | MAUBERE |

73. Penempatan nama dalam kasus ini akan menempatkan Mau di bidang nama depan dan Bere di bidang nama belakang.

Kanonikalisasi nama

74. Kanonikalisasi nama diterapkan kepada bidang nama depan dan nama belakang dari pencatatan setelah penempatan untuk membantu mencocokkan secara lebih mudah, khususnya algoritma otomatis untuk hubungan pencatatan (record linkage). Variasi-variasi ejaan untuk nama-nama disaring ke dalam sebuah form representatif tunggal untuk setiap nama. Sebagai contoh, variasi ejaan berikut ini dikanonikalisasi menjadi AGUSTINO:

- AGUSTINUHO
- AAGUSTINO
- AGUSTIO
- AGUSTINUS
- AUGUSTINHO
- AGUSTINO
- AGUSTINU
- AGUSTONIO
- AGUSRINO
- AGUSTINHO
- AGUSTIMHO
- AGSSTINHO
- AGSTINHO
- AUGUSTINO
- AGOSTINHO
- AGUASTINHO
- ANTGOSTINHO
- AGUSTINHU
- AGOTINHO
- AGOSTINO

75. Nama-nama asli orang Timor-Leste lebih sulit untuk dikanonikalisasi karena umumnya hanya sepanjang empat atau lima huruf dan sejumlah pencatatan yang tampaknya merupakan variasi ejaan pada kenyataannya adalah nama yang jelas berbeda. Kanonikalisasi yang konservatif diberlakukan terhadap nama-nama asli orang Timor-Leste dan kemudian diuji dengan keterhubungan sampel dengan pencatatan animis yang melihat pada tanggal, usia, dan tempat informasi untuk menentukan kanonikalisasi tambahan untuk diterapkan.

76. Setelah beberapa penempatan terhadap nama-nama tersebut untuk dikanonikalisasi, sebuah bidang baru dibuat dengan nama dieja secara terbalik. Kemudian, dengan menyortir bidang baru ini kita dapat menemukan nama-nama tambahan untuk dikanonikalisasi menjadi bentuk tunggal karena huruf awal dapat bervariasi menurut pengucapan, tetapi silabel akhir cenderung sama. Proses ini terbukti sangat menolong dalam menemukan kanonikal tambahan.

77. Ada juga nama-nama Cina, Indonesia (Muslim), dan nama-nama Anglo-Saxon di dalam basis-basis data ini, seperti halnya nama-nama Portugis dan nama asli orang Timor. Relatif sedikitnya jumlah nama-nama Cina, Indonesia, dan Anglo-Saxon tidak membutuhkan penanganan khusus. Staf orang Timor-Leste, di Timor, mengidentifikasi apakah nama-nama adalah nama asli untuk penerapan aturan-aturan dan algoritma yang sesuai, karena nama-nama asli Timor-Leste tidak selalu spesifik menurut jenis kelamin.

78. Basis-basis data HRVD dan RMS lebih kecil daripada GCD, sehingga kami menganonikalisasi basis-basis data itu terlebih dahulu. Kemudian, kami menerapkan daftar nama kanonikal terhadap GCD. Nama-nama hasil kanonikalisasi kemudian diperiksa kembali untuk mengidentifikasi kanonikal tambahan.

79. Selama proses kanonikalisasi, beberapa huruf dalam nama-nama ternyata bisa saling menggantikan, dan ini umumnya terjadi dengan nama-nama Portugis. Huruf-huruf S, J, G, dan Z sering saling menggantikan satu sama lain dalam nama-nama tersebut. Juga, huruf-huruf V, U, W, dan B juga sering saling menggantikan. Yang kurang sering terjadi adalah huruf-huruf H dan E saling menggantikan, atau dihilangkan begitu saja, contohnya Helder/Elder, Henrique/Enrique. Satu contoh dari saling menggantikan adalah nama Virginia, yang dapat dieja dengan B atau V. Sebagai contoh, variasi ejaan yang ditemukan untuk VIRGINIA kanonikal antara lain BIRGINIA, BERGINA.

80. Nama-nama yang dimulai dengan huruf-huruf ini dibandingkan satu sama lain untuk membantu dalam proses kanonikalisasi. Jika nama-nama itu mempunyai lebih daripada satu huruf yang bisa saling menggantikan atau huruf yang bisa tergantikan itu berada di bagian tengah atau akhir sebuah nama, sangat sulit menemukan kemungkinan kanonikal. Oleh karena itu, sebuah program ditulis yang membangun sebuah daftar nama di mana kombinasi dari huruf-huruf yang saling menggantikan cocok nama kanonikal yang lain. Ahli jaringan pencatatan mengulas kombinasi-kombinasi ini untuk menentukan apakah kombinasi-kombinasi tersebut harus dikanonikalisasi ataukah kombinasi itu adalah nama-nama yang jelas khas. Jika ada kanonikalisasi tambahan karena adanya huruf yang saling menggantikan, huruf yang cenderung dipilih untuk kanonikal adalah S (untuk S, J, G, dan Z), V (untuk V, U, W, B), dan H (untuk H dan E).

81. Sebagai tambahan, dalam proses kanonikal, diperhatikan bahwa ANJU dan ANJO sering dikutip sebagai nama depan atau satu-satunya nama dalam sebuah pencatatan. *Anju* umumnya digunakan untuk menunjuk kepada bayi yang meninggal dan sering ditemukan dalam pencatatan GCD jika seorang anak

meninggal sebelum dibaptis dan karenanya tidak diberikan sebuah nama Kristen. Pencatatan dengan menggunakan S dan sebuah nama belakang digunakan untuk proses pencocokan karena ada beberapa data yang teridentifikasi, namun pencatatan dengan *ANJU* semata sangat ambigu untuk dibuat keputusan yang beralasan untuk pencocokan.

Pengodean jenis kelamin dan etnik

82. Selama proses kanonikalisasi, nama depan Portugis diperiksa kembali dengan frekuensi pengodean jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan yang tidak diketahui.^{*} Pengodean jenis kelamin yang jelas salah dibetulkan. Sebagaimana dengan kebanyakan nama Latin, nama-nama yang berakhir dengan A umumnya seorang perempuan dan nama yang berakhir dengan O (atau U) biasanya laki-laki. Jika nama depan berakhir dengan huruf-huruf lain selain A, O, atau U, frekuensi antara pengodean laki-laki dan pengodean perempuan diteliti dan jika perbedaannya besar, yang menunjukkan bahwa beberapa pencatatan telah dikodei secara salah selama pemasukan data, maka perbaikan dilakukan terhadap basis data.

Konversi data

83. Demi melancarkan semua langkah pengolahan data yang berhubungan dengan mencocokkan pencatatan yang berganda, setiap set data ditransfer dari FoxPro aslinya atau program basis data Excel, ke program basis data Analyzer.[†] Skema basis data FoxPro pertama-tama digandakan dalam PostgreSQL untuk dimasukkan ke dalam Analyzer. Struktur basis data relasional untuk data HRVD dan RMS disimpan dalam Analyzer.

84. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah total pencatatan dari setiap set data yang dimasukkan ke dalam Analyzer. Harap dicatat bahwa jumlah total ini merefleksikan perubahan pembersihan data yang mengakibatkan dibuangnya pencatatan-pencatatan yang berganda atau invalid.

^{*} Frekuensi merupakan hitungan kemunculan suatu nama atau kode dalam bidang tertentu. Nilai dengan frekuensi sangat rendah dapat saja menunjukkan suatu potensi kesalahan atau salah eja dalam data.

[†] Analyzer adalah aplikasi sumber yang bebas dan terbuka yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis informasi tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berskala besar. Untuk informasi selengkapnya tentang Analyzer, lihat website HDRAG pada http://www.hrdag.org/resources/data_software.shtml

Tabel 6: Perhitungan total yang tercatat oleh basis data sebelum dan sesudah pembersihan

| Basis data | Pra-Pembersihan | Pasca Pembersihan | Perhitungan/% Fatal | Perhitungan/% Nonfatal |
|------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| HRVD | 41.456 | 37.651 | | |
| RMS | 4.883 | 4.619 | | |
| GCD | | | | n/a1* |

Tinjauan pertalian catatan (*record linkage*)

85. Berbagai individu yang dilaporkan dalam HRVD dan RMS kadang dilaporkan beberapa kali, oleh deponen yang berbeda dan mungkin juga muncul dalam catatan GCD. Untuk memastikan agar analisa statistik dapat mengontrol laporan berganda untuk orang yang sama, data tersebut membutuhkan analisa hubungan pencatatan, juga dikenal sebagai pencocokan. Pencocokan diterapkan pada dua kategori umum untuk kajian ini—pelanggaran fatal dan nonfatal. Pelanggaran-pelanggaran fatal termasuk pembunuhan warga sipil, kematian karena penelantaran, penghilangan, dan kematian petempur. Kategori pelanggaran nonfatal mencakup percobaan pembunuhan warga sipil, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, kekerasan seksual, perlakuan buruk, pemindahan, perkawinan paksa, halangan atas hak-hak reproduktif, pengadilan tidak adil, penghancuran rumah, penghancuran ternak, pemerasan, pengancaman, perekrutan paksa, dan kerja paksa.

86. Ada dua jenis pencocokan yang dilakukan untuk keperluan perkiraan statistik: pencocokan intra-sistem dan antarsistem. Pencocokan intra-sistem menghubungkan catatan-catatan yang mengidentifikasi orang yang sama dalam sebuah set data tunggal, dan masing-masing catatan bisa cocok dengan nol, satu, atau banyak catatan lain dalam set data tersebut. Pencocokan antar-sistem menggabungkan dua atau lebih daftar pencatatan yang khas dari sumber-sumber data yang berbeda secara bersamaan sehingga sebuah perkiraan sistem berganda dapat dilakukan. Pencocokan catatan-catatan dalam proses pencocokan antarsistem hanya dapat cocok dengan nol atau satu catatan lain dalam setiap set data lainnya.

87. Karena rumitnya pencocokan antarsistem dan pembatasan waktu kerja, data pelanggaran nonfatal dalam HRVD dan RMS hanya mempunyai pencocokan intra-sistem untuk statistik deskriptif. Data fatal, termasuk data GCD, telah dicocokkan secara intra-sistem maupun antarsistem sebagai landasan bagi kalkulasi perkiraan

* Bidang ini tidak berlaku untuk bidang GCD karena menurut definisi, seseorang yang dikubur di sebuah pemakaman berarti sudah meninggal.

sistem berganda. Pencocokan dilakukan menggunakan tiga metode: pencocokan manual dengan tangan, pencocokan oleh komputer, dan pencocokan yang dibantu oleh komputer. Tiap metode ini dapat melibatkan lebih daripada satu *pass*.^{*}

Aturan-aturan pencocokan

88. Tiap catatan tunggal dibandingkan ke semua catatan lainnya dalam setiap set data untuk mencari pencocokan yang mungkin dan dianggap cocok ketika angka-angka penting dari nilai-nilai bidang cocok **persis**, **sangat dekat** atau **tidak bertentangan**. Bidang-bidang yang digunakan untuk pencocokan adalah: nama_depan, nama_belakang, usia, jenis kelamin, Tanggal Lahir (date_of_birth, DOB), Tanggal Mati (date_of_death, DOD), Tempat Lahir (place_of_birth, POB), dan Tempat Mati (place_of_death, POD). Bidang untuk nama tengah/nama kecil dan tempat wawancara juga digunakan untuk keperluan klarifikasi, tapi bukanlah merupakan bidang-bidang yang tersedia di ketiga set data ini, dan sering jarang tersedia. Meskipun bukan merupakan bagian dari aturan-aturan pencocokan, data-data ini tetap dipertimbangkan oleh ahli penghubungan catatan, tapi tidak digunakan dalam pencocok otomatis oleh komputer manapun.

89. Keputusan-keputusan pencocokan yang digunakan untuk data Komisi cenderung mencocokkan data secara berlebihan.[†] Pencocokan berlebihan mengurangi jumlah catatan khas dan karena itu akan cenderung mengurangi perkiraan. Pencocokan berlebihan lebih sering dipakai dalam kasus-kasus di mana terdapat ketidakpastian bahwa suatu pencocokan akurat, untuk menghasilkan perkiraan-perkiraan yang konservatif.

Pencocokan nama-nama

90. Bidang-bidang nama depan dan nama belakang tidak selalu lengkap; sebagian hanya inisial atau tidak ada salah satu dari nama depan atau belakang. Diupayakan dilakukan pencocokan atas setiap catatan meskipun tidak lengkap; tapi untuk pencocokan fatal, catatan-catatan yang tidak memiliki nama depan atau belakang atau hanya berupa inisial, dihapus dari pencocokan karena tidak cukup data untuk membuat penilaian yang dapat diandalkan. Untuk pencocokan nonfatal, diupayakan mencocokkan pelanggaran-pelanggaran dengan DOB, DOD, dan informasi lokasi kematian dengan catatan-catatan lain dengan nilai sama pada bidang-bidang tersebut, meskipun tidak ada nama atau catatan tersebut hanya berupa inisial. Catatan-catatan dengan data nama yang kurang lengkap sangat bergantung pada tanggal dan tempat yang sempurna untuk dapat dicocokkan dengan catatan-catatan lain. Banyak orang bisa saja meninggal pada hari dan tempat yang sama, dan untuk mengetahui orang yang mana untuk dicocokkan dengan nama yang tidak lengkap, sangatlah sulit dan tidak dapat diandalkan.

^{*} *Pass* adalah tinjauan atas semua data dalam sebuah set data berdasarkan urutan atau algoritma untuk mencari kecocokan.

[†] Kelebihan pencocokan (*over-matching*) artinya hubungan-hubungan dibuat antara catatan-catatan yang mungkin saja tidak digandakan.

Pencocokan jenis kelamin dan etnis

91. Bilamana jenis kelamin korban diketahui, hanya mungkin dapat dicocokkan dengan catatan-catatan dari jenis kelamin sama atau yang jenis kelaminnya tidak diketahui. Catatan-catatan di mana jenis kelamin ditandai Tidak Diketahui bisa dicocokkan dengan catatan-catatan yang dikodei Laki atau Perempuan, tapi dalam grup yang cocok, kode-kode jenis kelamin tidak bisa bertentangan dengan catatan-catatan lain dalam grup tersebut.

Pencocokan lokasi

92. Kode-kode lokasi geografis yang digunakan untuk data Komisi dibagi dalam empat tingkatan: distrik, subdistrik, *suco* (desa), dan *aldeia*. Basis data GCD adalah satu-satunya set data yang menguraikan informasi lokasi sampai tingkat *aldeia*, jadi tidak digunakan untuk keperluan pencocokan. Seringnya pemindahan membuat para saksi sulit menunjuk secara tepat informasi lokasi, kecuali di tempat-tempat pelanggaran terjadi, di tempat saksi tinggal saat itu, atau tempat mereka semula mengalami pemindahan. Orang bisa saja mengalami pemindahan beberapa kali di beberapa lokasi, dan karena konflik berlangsung selama tiga dekade, untuk mengingat lokasi yang tepat bisa saja mengalami kesalahan-kesalahan.

93. Selain itu, batas-batas antara berbagai lokasi geografis dipengaruhi oleh tiga faktor: perubahan nama tempat dan batas geografis dari batas-batas administratif seiring waktu; tidak persisnya batas-batas, terutama di daerah pedalaman; dan kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan, pengodean, dan pemasukan data. Karena itu, pencocokan di sana-sini dalam suatu distrik dan di antara distrik-distrik yang berbatasan dipertimbangkan juga. Kemungkinan kecocokan antara sebuah subdistrik dengan *suco* yang berdekatan juga diberikan preferensi yang lebih tinggi. Dalam mempelajari data secara teliti, catatan-catatan yang cocok pada lebih banyak bidang data selain tempat, memperkuat penilaian kami untuk pencocokan lokasi. Jika HRVD mendokumentasi sebuah kematian pada lokasi yang sama dengan lokasi wawancara, diasumsikan bahwa informasi lokasi sangat mungkin akurat.

94. Dalam kasus-kasus yang langka, pencocokan dilakukan dengan melanggar aturan untuk data lokasi, tapi hanya jika jelas catatan-catatan tersebut mengidentifikasi orang yang sama, dan bahwa kesalahan-kesalahan umum pengetikan diperhitungkan untuk perbedaan tersebut. Jika ada lebih daripada satu kemungkinan pencocokan, algoritma pencocokan dicobakan untuk dicocokkan dengan catatan-catatan yang kurang spesifik agar dapat menyisakan catatan-catatan yang lebih spesifik untuk digunakan pada pencocokan berikutnya.* Jika ada persebaran yang merata antara

.....
* Catatan-catatan dihubungkan bersama dan data yang khas untuk setiap catatan disimpan, karena yang bertentangan dengan duplikasi dihapus. Sebagai hasilnya, perlu dilihat keragaman dalam catatan-catatan yang cocok untuk mengetahui jika perbedaan-perbedaan itu akan mengubah analisis secara mendasar.

lokasi dalam tingkatan geografis tertentu, lokasi yang kurang spesifik dipilih dan jika ada satu yang tidak lebih kurang spesifik, dari satu yang dipilih secara acak untuk menjadi 'rep rec.'

Mencocokkan tanggal

95. Karena konflik di Timor-Leste terjadi dalam waktu yang panjang, banyak responden tidak mengingat tanggal dan tempat pasti dari kejadian-kejadian yang berlangsung. Data GCD diasumsikan lebih akurat dalam informasi tanggal dan tempat karena mayat-mayat biasanya dikubur sesaat setelah kematian, dan dekat dengan tempat kematian. Ketika pencocokan dilakukan pada bidang tanggal, ahli hubungan catatan (*record linkage expert*) akan menghubungkan catatan-catatan yang lebih atau kurang tiga tahun dari yang lainnya. Jarang terdapat pengecualian untuk aturan ini, dan hanya dilakukan ketika bidang-bidang data lainnya cocok secara kuat. Catatan-catatan dengan data bulan dan tanggal sering tidak akurat dalam data HRVD dan RMS, karena ingatan cenderung salah dalam periode waktu lama seperti itu. Untuk itu, tanggal-tanggal yang lebih spesifik dicocokkan satu sama lain jika tanggal-tanggal itu berdekatan, dan dicocokkan pada tanggal-tanggal yang kurang spesifik jika mereka tidak berdekatan.

Pembatasan tingkat pencatatan

96. Pembatasan pencocokan dilakukan untuk mencegah kelebihan pencocokan (*overmatching*). Secara khusus, pencocokan berikut tidak diperbolehkan:

- Catatan-catatan tentang korban-korban dari pernyataan yang sama (karena setiap pernyataan mengidentifikasi korban tertentu yang bisa saja mempunyai nama yang sama karena hubungan keluarga)
- Dua korban nonfatal tidak bisa dicocokkan jika mereka dilaporkan dalam sumber catatan yang sama (karena pengodean data dan metode representasi basis data yang digunakan mencegah duplikasi catatan dari satu pernyataan tunggal dimasukkan dalam basis data)
- Seorang deponen tidak bisa dicocokkan dengan sebuah pelanggaran fatal
- Sebuah catatan nonfatal tidak dapat dicocokkan dengan sebuah catatan fatal jika tanggal tertentu yang dihubungkan dengan pelanggaran nonfatal terjadi sebelum Tanggal Lahir (DOB) catatan fatal
- Sebuah catatan nonfatal tidak dapat dicocokkan dengan sebuah catatan fatal jika tanggal tertentu yang dihubungkan dengan pelanggaran nonfatal terjadi setelah Tanggal Mati (DOD) dari catatan fatal.

.....
* 'rep rec' adalah catatan yang mewakili secara baik kelompok-kelompok catatan pencocokan dengan data yang paling lengkap. Catatan-catatan dengan tanggal dan tempat yang sangat umum dalam kelompok atau catatan dengan tempat atau tanggal yang lebih pasti dianggap lebih lengkap. Semakin lengkap data, semakin baik setiap putaran pencocokan yang berikutnya dari pencocokan intra-sistem maupun pencocokan antarsistem. Karena catatan-catatan ini dihubungkan bersama dan data yang khas untuk setiap catatan disimpan, serta yang merupakan duplikasi dihapuskan, sangat penting untuk memperhatikan variasi dalam catatan-catatan pencocokan untuk melihat jika perbedaan-perbedaan itu dapat mengubah analisis secara berarti.

Pencocokan intra-sistem

97. Dalam sebuah set data, seseorang bisa saja diidentifikasi oleh beberapa saksimata. Pencocokan intra-sistem menghubungkan catatan-catatan yang mengidentifikasi orang yang sama, untuk menghasilkan daftar orang dengan nama khas, untuk mencegah kelebihan perhitungan, dan akhirnya, kelebihan perkiraan. Pencocokan intra-sistem sangat rumit dan sulit untuk dilakukan dalam sebuah basis data, karena seseorang bisa cocok dengan sejumlah n catatan lainnya dalam set data. Karena itu, data diatur dalam sebuah program pengolah data (*spreadsheet*), yang lebih memudahkan untuk mengatur dan mengatur kembali data-data tersebut dalam berbagai cara untuk menemukan hubungan-hubungan yang perlu dibuat.

98. Pencocokan intra-sistem yang dilakukan terhadap sebuah set data sebelum catatan-catatannya digabung dengan set data lain dapat memperlihatkan pola-pola yang melekat pada proyek pengumpulan data tersebut. Sebagian pola-pola ini mungkin saja merupakan kesalahan sistematis dalam pengumpulan, pengodean, atau pemasukan data, atau bisa saja merupakan hasil dari struktur pengumpulan data tersebut. Pengamatan pola-pola ini dalam setiap set data perlu dilakukan, dan jika perlu, dilakukan perbaikan kesalahan-kesalahan yang digarisbawahi.

99. Ketiga set data Komisi jika dikombinasikan akan menjadi sangat besar untuk memungkinkan pencocokan data berkualitas tinggi, karena sejumlah pola itu tidak akan terlacak oleh mata manusia. Jika ketiga set data itu dikombinasikan ke dalam sebuah daftar tunggal, hasilnya adalah daftar yang terdiri atas lebih daripada 160.000 catatan. Mencari catatan-catatan yang cocok dalam daftar sepanjang ini akan sangat sulit bagi seorang pembaca.

Pencocokan fatal intra-sistem HRVD

100. Pertama-tama, pencocokan intra-sistem pada data fatal dalam HRVD dilakukan untuk menghubungkan catatan-catatan yang mendeskripsikan korban yang sama. Catatan-catatan itu dimasukkan ke dalam *spreadsheet* dan disortir berdasarkan nama depan, nama belakang, POD, dan DOD, untuk menemukan catatan-catatan yang cocok.

101. Saat catatan-catatan dihubungkan, sebuah 'rep rec' dipilih.* Setelah setiap penyortiran, sebuah *pass* pencocokan dilakukan dan catatan-catatan yang berhubungan dalam sebuah grup pencocokan disembunyikan (tapi tidak dihilangkan) dari berkas data yang dihasilkan, sehingga hanya tinggal 'rep rec'-nya. Ini mengurangi *noise* dalam data-data tersebut. *Noise* diartikan sebagai catatan-catatan non-'rep rec' dalam sebuah kelompok pencocokan yang mengalihkan pencocok dari kemungkinan hubungan-hubungan 'rep rec' dengan calon pencocokan lainnya. Semakin sedikit daftar catatan yang khas, semakin mudah untuk melihat kemungkinan kecocokan dan pola-pola lain di dalam data. Setiap *pass* berikutnya mengidentifikasi kecocokan

* Sebuah 'rep rec' adalah catatan yang mewakili grup yang dicocokkan, karena ada lebih daripada satu kemungkinan cocok.

tambahan, dan akhirnya, sebuah daftar catatan yang khas disaring dari keseluruhan set data. Sekurang-kurangnya lima *pass* dilakukan pada tiap set data.

102. Keseluruhan 15.043 catatan fatal dari set data HRVD direduksi menjadi sebuah daftar yang terdiri atas 11.145 korban khas. Semua catatan itu kemudian dimasukkan kembali ke dalam sistem pencocokan data Analyzer. Catatan-catatan yang cocok dihubungkan kembali dengan “rep rec” untuk dianalisis jika semua pencocokan telah dilakukan.

Pencocokan fatal intra-sistem RMS

103. Pencocokan fatal intra-sistem RMS dilakukan dalam sebuah *spreadsheet* setelah pencocokan intra-HRVD dilakukan. Pencocokan intra-sistem RMS menggunakan bidang-bidang yang sama dengan pencocokan intra-sistem HRVD dan juga melihat sumber dari pencatatan tersebut. Pencatatan-pencatatan kematian yang dikumpulkan dari rumahtangga yang sama tidak boleh dicocokkan satu sama lain karena pencatatan-pencatatan tersebut mengidentifikasi individu-individu khas, meskipun mereka memiliki nama dan DOD yang sama.

104. Sebanyak 4.883 catatan fatal set data RMS direduksi ke dalam sebuah daftar yang terdiri atas 4.619 korban khas.

105. Hubungan-hubungan yang dihasilkan dari set data HRVD dan RMS dimasukkan kembali ke dalam model data Analyzer untuk digunakan dalam pencocokan yang dibantu komputer (*computer-assisted*) dan pencocokan yang dihasilkan komputer (*computer-generated*), dan untuk menghasilkan data untuk analisa. Informasi dan pola-pola yang didokumentasi oleh ahli hubungan catatan (*record linkage expert*) dalam tahap pencocokan menggunakan tangan kemudian digunakan untuk menghasilkan aturan-aturan pencocokan dan algoritma untuk proses-proses pencocokan yang dibantu komputer dan pencocokan yang dihasilkan komputer

Pencocokan nonfatal intra-sistem HRVD

106. Algoritma komputer diatur untuk membersihkan dan mencocokkan pelanggaran nonfatal dalam HRVD. Langkah ini disebut sebagai *auto-matching*. Algoritma pencocokan otomatis untuk pelanggaran-pelanggaran nonfatal dalam HRVD dikembangkan karena batasan waktu dan sumber daya tidak memungkinkan penggunaan seorang ahli hubungan catatan. Jumlah korban nonfatal tiga kali lipat dari jumlah korban fatal yang dilaporkan dalam HRVD.

107. HRVD mempunyai 41.546 catatan. Pencocokan otomatis intra-sistem menghasilkan sebuah daftar yang terdiri atas 37.651 korban khas pelanggaran fatal dan nonfatal.

Penilaian dan pencocokan auto-kanonikalisasi nama nonfatal

108. Langkah pertama dalam proses auto-kanonikalisasi adalah membuat sebuah tabel dengan versi yang sudah bersih dari semua (fatal dan nonfatal) nama asli dalam basis data. Untuk nama depan, versi-versi tersebut di-*normalised*, *normalised-terse*,

first word of normalised (disebut *first-namefirst*), dan *first word of normalised-terse* (disebut *first-namefirst-terse*). Metode yang sama diterapkan pada nama belakang, namun kata terakhir yang digunakan, bukan kata pertama. Lalu, untuk setiap nama korban dari pelanggaran nonfatal, dicoba untuk dicocokkan dengan kombinasi nama lengkap nonfatal yang telah dinormalisasi berikut ini, pada semua nama lengkap fatal kanonikalisasi-tangan yang telah dinormalisasi:

- nama depan + nama belakang
- nama depan -pendek + nama belakang-pendek
- namadepan-pertama + namabelakang-terakhir
- nama depan-pertama-pendek + nama belakang-terakhir-pendek

109. Program pencocokan ini mencocokkan satu set lengkap informasi sebelum mencoba mencocokkan dengan informasi kurang lengkap. Pencocokan nama-nama nonfatal ke nama-nama fatal ini hanya dilakukan untuk nama-nama fatal yang telah dinormalisasi yang telah dipetakan ke dalam nama kanonikal yang khas; dengan informasi semakin pendek, jumlah nama yang dinormalisasi yang “diperbolehkan” untuk dicocokkan makin sedikit (yang diimbangi dengan fakta bahwa lebih mudah untuk membuat kecocokan, karena informasi yang kurang pendek lebih tahan terhadap keragaman pengodean dan kesalahan-kesalahan pemasukan data).

110. Untuk nama-nama lengkap yang tidak bisa dikanonikalisasi, nama depan dan nama belakang dikanonikalisasi secara independen. Urutan pencocokan nama depan adalah sebagai berikut:

- Nama depan
- Nama depan-pendek
- Nama depan-pertama
- Nama depan-pertama-pendek

111. Proses pencocokan berikutnya dikembangkan untuk mengikuti ronde pencocokan awal berdasarkan pada proses pembersihan dan pencocokan otomatis. Proses ini mencari kemungkinan kecocokan dengan nama-nama non-normalisasi dan mengidentifikasi kepadatan informasi per bidang data dari setiap catatan nama. Persentase catatan-catatan yang mengandung nilai-nilai tidak kosong untuk masing-masing bidang data adalah sebagai berikut:

- 9% memiliki tanggal_lahir (semunya memiliki lahir_geo1)
- 44% memiliki lahir_suco_lokasi
- 50% memiliki lahir_subdistrik_lokasi
- 53% memiliki lahir_distrik_lokasi
- 70% memiliki Nama depan
- 94% memiliki Jenis Kelamin
- 100% memiliki Nama belakang (karena ini adalah bidang wajib yang dibutuhkan untuk pencocokan)

112. Karena bidang nama belakang adalah satu-satunya bidang non-kosong untuk semua catatan, hanya bidang ini yang bisa digunakan dalam indeks *blocking*. *Blocking* melihat catatan-catatan di mana bidang yang di-*block* memiliki nilai sama. *Blocking* untuk bidang nama belakang dilakukan pada empat huruf pertama tiap nama. Algoritma pencocokan harus dikalibrasi dengan hati-hati: jika terdapat banyak bidang kosong, maka kecocokan lebih dekat dengan bidang-bidang non-kosong harus dilakukan (juga, kecocokan pada nama-nama belakang yang umum dihargai lebih sedikit).

113. Ada tiga jenis “kedekatan” yang bervariasi:

- Jumlah huruf dalam nama yang cocok (4, 8, atau semua)
- Jumlah tingkatan dalam lokasi kelahiran yang cocok (dari 1 sampai 3), dan
- Kedekatan yang diperlukan dari tanggal-tanggal (dari 1/3 tahun sampai 3 tahun)

114. Dengan dua pertiga dari nama-nama korban telah dikanonikalisasi secara otomatis, dan satu set peraturan yang didefinisikan dengan baik untuk kedekatan pencocokan yang diwajibkan untuk jumlah berbeda dari bidang-bidang non-kosong, tingkat kecocokan yang dihasilkan adalah sekitar 15% (dibandingkan dengan 25% untuk data pelanggaran fatal yang dicocokkan secara manual).

115. Tingkat kecocokan 15% untuk pelanggaran-pelanggaran nonfatal terlihat masuk akal karena:

- Hanya dua pertiga dari catatan-catatan nama yang dapat dikanonikalisasi, dan
- Biasanya diharapkan kepadatan laporan yang tinggi untuk pelanggaran-pelanggaran fatal karena biasanya pelanggaran-pelanggaran ini lebih mudah diidentifikasi dan lebih mudah diingat oleh banyak orang dalam jaringan sosial korban.

116. Sistem pencocokan otomatis inter-sistem pada data nonfatal mengurangi set data dari sejumlah 44.203 catatan menjadi sebuah daftar dengan jumlah 31.568 catatan khas korban.

Ulasan pencocokan nonfatal intra-sistem HRVD oleh ahli hubungan data

117. Ahli Hubungan Data mempelajari sampel hasil-hasil pencocokan-otomatis untuk memastikan tidak ada kesalahan pencocokan (yaitu kelebihan pencocokan). Tidak ada pola sistematis kelebihan pencocokan yang ditemukan dalam peninjauan kembali sampel acak jika 10% dari grup yang cocok dicatat. Grup catatan terbesar yang dicocokkan satu sama lain terdiri atas 20 catatan. Peninjauan dilakukan pada grup terbesar untuk memastikan apakah ukuran kecocokan mereka dapat diterima.

118. Pencocokan intra-sistem untuk data fatal menghasilkan daftar kombinasi dari individu-individu khas yang semuanya telah meninggal, meskipun penyebab kematian berbeda-beda. Ketika pencocokan intra dilakukan pada pelanggaran-pelanggaran nonfatal, seorang korban dapat mengalami satu atau lebih pelanggaran, dalam satu atau lebih hari, pada satu atau lebih tempat. Pencocokan nonfatal

memperlihatkan pelanggaran HAM yang dialami korban-korban individual, di mana seorang korban mungkin mengalami pelanggaran lain yang mungkin saja menimbulkan kematian atau tidak.

Pencocokan antarsistem

119. Pencocokan antarsistem menghubungkan daftar-daftar individu yang khas dari berbagai set data dan dilakukan secara kumulatif dalam berbagai pasangan atau set data. Pencocokan antarsistem hanya diterapkan pada data fatal. Pertama, pencocokan antarsistem diterapkan dengan menggunakan 11.126 catatan cocok intra-sistem dari HRVD pada 4.619 catatan cocok intra-sistem RMS dalam aplikasi Analyzer Record Linkage. Set data *sumber* fatal RMS dicocokkan dengan set data *target* fatal HRVD.*

Tahap 1 – Pencocokan yang dihasilkan komputer

120. Pencocokan ketat (disebut sebagai pencocokan P1) secara otomatis mengidentifikasi ‘pasangan pasti.’ Dengan menghasilkan ‘pasangan pasti’ melalui proses P1 otomatis menghilangkan inefisiensi yang ada jika manusia yang harus melakukan perbandingan setiap catatan di dalam atau di antara basis data, dengan setiap catatan lainnya.

121. Pencocokan berdasarkan algoritma diterapkan pada data untuk menghasilkan daftar pasangan potensial yang dianggap tinggi kemungkinannya. Kalkulasi yang didasarkan pada probabilitas dan frekuensi tiap bidang data dalam sebuah catatan dipertimbangkan dan diurutkan berdasar peringkat, dan tingkat ambang batas ditentukan di mana pencocokan yang sedang dibuat kemungkinan benar. Ambang batas ditentukan setelah dilakukan peninjauan dari pencocokan berbasis algoritma yang mungkin, yang mengeliminasi kebutuhan akan tenaga manusia untuk membandingkan setiap catatan untuk pasangan yang mungkin. Pencocokan potensial di bawah ambang batas tersebut ditangani dalam satu dari dua cara, bergantung pada apakah pencocokan dilakukan untuk fatal atau nonfatal, dan pencocokan intra-sistem atau antarsistem.

122. Untuk pencocokan antarsistem untuk data pelanggaran-pelanggaran fatal, kumpulan pencocokan yang dihasilkan algoritma dimasukkan ke dalam sistem pencocokan data Analyzer dan seorang ahli hubungan catatan (*record linkage expert*) mengulas target-target pencocokan yang dibantu komputer tersebut untuk setiap sumber catatan yang tidak tercocokkan. Pencocokan nonfatal intra-sistem sepenuhnya otomatis dengan hasil yang ditinjau oleh ahli hubungan catatan untuk memastikan kelebihan atau kekurangan ekstrem pencocokan tidak terjadi.

* Penunjukan sumber dan target ditentukan oleh jumlah catatan dalam dataset. Dari kedua dataset, yang lebih kecil dari kedua dataset menjadi sumber dan yang lebih besar adalah target. Ini untuk mengurangi angka atau catatan yang harus dibandingkan, tetapi tiap catatan dari kedua dataset dibandingkan terhadap semua pasangan potensialnya.

† Sebuah ‘pasangan pasti’ terjadi ketika dua atau lebih catatan dalam sebuah basis data cocok satu sama lain dan ketika semua bidang-bidang di mana keputusan pencocokan dibuat, identik.

Tahap 2 – Pencocokan dengan bantuan komputer

123. Pencocokan dengan bantuan komputer, disebut dengan P2, dilakukan berdasar algoritma yang menghasilkan banyak kecocokan potensial antara catatan-catatan sumber dan target, yang dianggap sangat mungkin, tapi memerlukan peninjauan oleh manusia untuk memilih mana dari catatan-catatan yang tertimbang yang merupakan pasangan yang paling baik. Kalkulasi berdasar probabilitas dan frekuensi tiap bidang data antara pasangan-pasangan catatan dipertimbangkan dan diurutkan berdasar nama, tanggal lahir, tanggal kematian, tempat lahir, dan tempat kematian. Dengan menggunakan *interface* pencocokan Analyzer, ahli hubungan catatan memilih catatan target mana dari kumpulan tersebut, jika ada, yang cocok dengan catatan sumber yang sedang diperiksa.

124. Aturan-aturan pencocokan intersistem fatal P2 adalah:

- Jenis kelamin sumber dan target harus sama, di mana jenis kelamin diketahui.
- Inisial pertama dari nama-nama antara sumber dan tujuan (-tujuan) harus sama.
- Untuk target (-target), di mana DOB dan DOD diketahui, salah satu tanggal harus berada dalam jarak lima tahun dari tanggal sumber.
- Jika sumber dan target(-target) potensial mempunyai DOB atau DOD yang “sempurna”, paling tidak salah satu dari bidang pencocokan lainnya harus sama.

125. Setelah pencocokan antarsistem dilakukan antara set data HRVD dan RMS dalam Analyzer, daftar para korban fatal khas yang dihasilkan dimasukkan ke dalam sebuah *spreadsheet*. Catatan-catatan itu kemudian diurutkan pada berbagai bidang data untuk menentukan apakah kecocokan yang mungkin lainnya dapat ditemukan. Ini tidak saja berfungsi untuk mendapatkan kecocokan yang terlewat, tapi juga mengukur sebaik apa fungsi algoritma pencocokan tersebut. Penyempurnaan algoritma tambahan dilakukan sebagai hasil dari tinjauan ahli hubungan catatan, untuk memastikan *pass* pencocokan suksesif akan lebih teliti dan akurat.

Tahap 3 – Pencocokan data yang tidak jelas

126. Dalam pencocokan Tahap 3 (P3), catatan-catatan yang mengandung terlalu banyak bidang kosong, atau catatan-catatan individu bernama umum dari area sama, atau yang meninggal dalam periode waktu sama, dicocokkan. Pencocokan ini tidak memiliki cukup data untuk secara spesifik menentukan, misalnya, pasangan sumber/target mana yang tepat, jadi satu dipilih secara acak dari tujuan-tujuan tersebut. Sebagai contoh, Mau Bere adalah nama yang sangat umum di berbagai tempat di negeri ini, dan 1999 adalah tahun di mana mereka meninggal. Kemungkinannya kecil ada pencocokan intra-sistem yang terlewat, karena dua alasan. Pertama, mereka adalah catatan-catatan yang sering datang dari pernyataan kesaksian yang sama, yang mengindikasikan mereka adalah anggota keluarga yang memiliki nama sama. Kedua, GCD mencatat banyak kematian dalam pemakaman yang sama dengan nama dan tanggal sama (atau tanpa tanggal), tapi tidak banyak

informasi yang dapat mengidentifikasi dalam set data HRVD dan RMS untuk membedakan mereka menjadi individu-individu khas.

127. Proses pencocokan P3 menjadikan kecocokan-kecocokan di mana ada probabilitas yang sama akan kecocokan bagus sebuah catatan, yang tidak memerlukan penilaian ahli hubungan catatan.

Pencocokan fatal pasangan-baik antarsistem

128. Pasangan pencocokan antarsistem HRVD dan RMS menghasilkan daftar baru korban-korban khas, yang disebut set data HRVD/RMS. Set data ini termasuk 10.594 catatan yang ditemukan hanya dalam set data HRVD, 4.087 catatan yang ditemukan hanya dalam RMS set data, dan 532 catatan yang ditemukan dalam HRVD dan RMS. 15.213 catatan-catatan khas total ini kemudian dicocokkan secara antarsistem dengan 149.267 catatan dalam set data GCD. Set data HRVD/RMS menjadi sumber datanya dan GCD target datanya. Pencocokan secara berpasangan antara set data HRVD/RMS ke dalam GCD menghasilkan 157.000 nama orang yang telah meninggal. Total ini termasuk catatan-catatan di luar mandat atau tidak memiliki tanggal kematian, yang bisa memverifikasi apakah mereka meninggal dalam periode mandat. Hanya catatan-catatan yang memiliki tanggal kematian dalam periode mandat yang digunakan untuk analisa.

129. Hubungan-hubungan dalam dan antara set data digunakan dalam memperkirakan jumlah total kematian karena konflik. Catatan-catatan dalam daftar akhir ini dapat dihubungkan kembali ke dalam set data tunggal, atau kombinasi dari ketiga set data. Di bawah ini adalah matriks sederhana yang menunjukkan hasil dari pencocokan fatal antarsistem terakhir yang mencocokkan hubungan antara berbagai set data.*

Tabel 7: Matriks hasil pencocokan antarsistem

| | Hanya HRVD | Hanya RMS | Hanya GCD | HRVD & RMS | HRVD & GCD | RMS & GCD | HRVD/RMS/GCD | Total |
|--------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| Jumlah | 5.203 | 2.148 | 141.787 | 382 | 5.391 | 1.939 | 150 | 157.000 |
| Persen | 3,31 | 1,37 | 90,31 | 0,24 | 3,43 | 1,24 | 0,1 | 100 |

130. Jika pencocokan intra-sistem menangkap semua kecocokan yang mungkin, maka hanya nol atau satu kecocokan potensial yang mungkin selama pencocokan antarsistem. Kecocokan bisa terlewat jika catatan-catatan yang sedang diperiksa memiliki bidang-bidang data yang hilang, yang menjadikannya tidak jelas apakah

* Ini adalah total yang tidak dipertimbangkan, termasuk catatan-catatan tanpa tanggal, tanggal di luar jangka waktu, tanpatempat, dan tempat di luar Timor-Leste. Catatan-catatan di luar jangkauan ini kemudian dihilangkan dari analisa.

kedua catatan tersebut harus dihubungkan. Kesalahan manusia juga mungkin ketika melihat besarnya kuantitas data yang ada dalam pekerjaan Komisi. Secara umum, sebuah kecocokan diasumsikan ketika mayoritas bidang data cocok, atau bobot kecocokan catatan-catatan tersebut masih dalam toleransi. Jika tidak terdapat cukup bidang dengan data lengkap, sulit untuk menentukan dengan kepastian yang beralasan apakah suatu catatan seharusnya disertakan atau tidak disertakan dalam pencocokan dengan catatan lainnya. Kasus yang ke dua terutama benar untuk nama-nama asli Timor yang sangat umum, seperti Mau Bere, di mana banyak orang, dari tempat sama, meninggal atau dibunuh pada waktu yang sama.

131. Setelah menyelesaikan pencocokan antarsistem dalam Analyzer, data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah *spreadsheet* untuk ditinjau oleh ahli hubungan catatan. Dengan melihat data yang diurut berdasar variabel-variabel berbeda, dengan proses berganda—baik oleh manusia atau otomatis—dapat secara yakin disimpulkan bahwa semua kemungkinan pencocokan yang seharusnya dilakukan, telah diproses. Selain itu, proses pencocokan antarsistem dapat dianggap sebagai suatu pengukuran Inter-Rater Reliability (IRR), karena menemukan contoh-contoh di mana pencocokan terlewat dalam tahap intra-sistem. Dengan kembali pada data intra-sistem dan menerapkan pencocokan yang terlewat, dimungkinkan untuk mengukur bukan saja IRR tapi juga memperbaiki data, yang menghasilkan data yang lebih bisa diandalkan yang dengannya perkiraan dapat dilakukan.

Tabel 8: Tabel total catatan perhitungan pencocokan antarsistem dan persentase pelanggaran fatal menurut pasangan set data

| Langkah | HRVD ke RMS | HRVD/RMS ke GCD |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Mulai perhitungan | $HRVD + RMS = HRVD/RMS$ | |
| Pencocokan Spreadsheet | Hitung & Persen | |
| Diperbaiki dari yang terlewat | Hitung & Persen | |
| HRVD/RMS total | Hitung & Persen | |
| Mulai perhitungan | | $HRVD/RMS + GCD = MSE$ |
| Pencocokan P1 | | Hitung & Persen |
| Pencocokan P2 | | Hitung & Persen |
| Pencocokan P3 | | Hitung & Persen |
| Total Perhitungan untuk MSE | | Hitung & Persen |

Pengolahan data pelanggaran yang dilaporkan melibatkan kelompok-kelompok korban tak dikenal

132. Selama proses pengambilan pernyataan, seorang deponen mungkin saja telah berbicara tentang satu atau banyak korban. Terkadang, ketika korban berganda dilaporkan oleh seorang deponen, ia tidak mengetahui beberapa atau semua dari nama-nama para korban tersebut. Di dalam proses pengambilan pernyataan Komisi, 1,9% (1.419/75.443) dari catatan tentang korban yang didokumentasikan oleh Komisi, deponen tidak mengetahui nama korban-korban yang mengalami pelanggaran sebagai anggota dari kelompok yang lebih besar.

133. Untuk mengintegrasikan data ini ke dalam analisa Komisi, dan menimbang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap individu-individu yang diketahui namanya maupun kelompok-kelompok yang tidak diketahui namanya, beberapa pengolahan data lebih lanjut dibutuhkan untuk memperhitungkan kemungkinan duplikasi pencatatan pelanggaran terhadap kelompok korban yang dilaporkan. Langkah-langkah pengolahan untuk mencegah duplikasi ini

- mengidentifikasi catatan-catatan pelanggaran (terhadap kelompok korban tak dikenal) yang tampak digambarkan sebagai kelompok korban yang sama, dan kemudian
- memilih sebuah catatan korban dari kelompok catatan-catatan kemungkinan duplikasi untuk dipertahankan sebagai “rep rec” dari pelanggaran yang dilaporkan tersebut

134. Tidak seperti data pelanggaran terhadap individu (yang sedikit tidaknya mengandung pengidentifikasian pribadi, seperti nama, umur, dan jenis kelamin), pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan atas kelompok pada umumnya tidak mengandung pengidentifikasian pribadi yang terperinci dari kelompok korban. Akibatnya, catatan-catatan korban-kelompok dicocokkan dengan cara membandingkan variabel-variabel berikut dari setiap pelanggaran yang dilaporkan terhadap sebuah kelompok:

- distrik di mana pelanggaran dilaporkan terjadi
- jenis pelanggaran yang ke dalamnya pelanggaran tersebut dikodekan, dan
- tahun dan bulan pada waktu pelanggaran dilaporkan terjadi

135. Kemudian, setelah semua catatan jenis korban-kelompok dicocokkan bersama untuk membentuk sebuah kluster (kelompok sampel), catatan dengan jumlah kelompok paling besar di dalam setiap kluster dipertahankan. Semua catatan yang lain dianggap sebagai catatan duplikasi dan karenanya dikeluarkan dari set data.

136. Tingkat duplikasi di antara korban-kelompok ditunjukkan di dalam tabel di bawah ini. Tabel ini menunjukkan berapa banyak salinan pelanggaran duplikasi per jenis pelanggaran yang diidentifikasi dalam set data dan jumlah catatan pelanggaran

kelompok surplus yang dikeluarkan dari analisa Komisi tentang pelanggaran atas korban-kelompok.

Tabel 9: Tingkat duplikasi di antara korban-kelompok

| Jilid 1 | Penahanan | | Penyiksaan | | Penga- niayaan | | Pemindahan | | Pelanggaran lain | | Semua pe- langgaran | |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | Obs | Sur- plus | Obs | Sur- plus | Obs | Sur- plus | Obs | Sur- plus | Obs | Sur- plus | Obs | Sur- plus |
| 1 | 441 | 0 | 134 | 0 | 121 | 0 | 180 | 0 | 736 | 0 | 1612 | 0 |
| 2 | 150 | 75 | 26 | 13 | 30 | 15 | 68 | 34 | 206 | 103 | 480 | 240 |
| 3 | 69 | 46 | 15 | 10 | 9 | 6 | 21 | 14 | 87 | 58 | 201 | 134 |
| 4 | 56 | 42 | 4 | 3 | 8 | 6 | 16 | 12 | 60 | 45 | 144 | 108 |
| 5 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 8 | 30 | 24 | 70 | 56 |
| 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 10 | 12 | 10 | 36 | 30 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 24 | 22 |
| 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 26 | 24 |
| Total | 772 | 211 | 179 | 26 | 186 | 42 | 307 | 78 | 1156 | 263 | 2600 | 620 |

Teknik-teknik perkiraan statistik yang digunakan dalam analisis pelanggaran fatal dan pemindahan

137. Bagian ini menjelaskan tentang teknik estimasi berbasis survei dan metode estimasi sistem berganda yang digunakan untuk membuat estimasi dari total tingkatan dan pola kematian dan pemindahan selama masa acuan Komisi.

Kalkulasi beban RMS

138. Sampling survei telah dijelaskan sebelumnya: pada 2003, tim-tim kerja lapangan CAVR mewawancarai 1.396 rumahtangga yang dipilih dari 138 *aldeia* dan kelompok-kelompok *aldeia*, yang disebut sebagai kluster. Kluster-kluster ini dipilih dengan metode yang disebut 'Probability Proportional to Size' (PPS) dan kemudian

sepuluh (atau 20) rumahtangga dipilih dengan sampel acak sederhana dari dalam setiap kluster. Apabila setiap kluster memiliki jumlah rumahtangga sampel yang persis sama, probabilitas sampel dari setiap rumahtangga akan sama—proses yang disebut sebagai ‘*self-weighting*’.⁸ Karena *sampling* atas 20 rumahtangga dalam kluster multi-*aldeia* dan non-respons dalam kluster lainnya, tidak semua kluster memiliki jumlah sampel rumahtangga yang sama; namun, 78,5% dari kluster sampel memiliki tepatnya 10 rumahtangga yang dijadikan sampel. Non-respons adalah 3,1%, sehingga tidak ada penyesuaian non-respons yang perlu dilakukan. Beban statistik kemudian dihitung dengan cara berikut ini.

139. Untuk setiap kluster, penyesuaian untuk ukuran kluster yang berbeda adalah:

- $\text{kluster_penyesuaian} = \text{median_kluster_ukuran} / \text{kluster_ukuran}$

140. Kemungkinan kasar *sampling* rumahtangga 1990 adalah

- $\text{sp_1990} = (\text{jumlah total Rumahtangga [RT] tersampel}) / (\text{total RT di tahun 1990}) = 1.396/168.858 \text{ sp}$

141. Maka, untuk setiap kluster, beban PPS adalah

- $\text{pps_beban_1990_kasar} = (1/\text{sp_1990}) * \text{kluster_penyesuaian}$

142. Ada perubahan populasi yang cukup besar karena migrasi dan pertumbuhan antara 1990 dan 2004, ketika survei ini dilakukan. Sebelum beban statistika ini bisa diperkirakan, jumlah total rumahtangga di setiap *aldeia* disesuaikan dari sensus 1990 dengan menggunakan data dari sensus 2004. Di dalam desain sampel, kluster-kluster dipilih dengan menggunakan jumlah rumahtangga untuk setiap *aldeia* yang dilaporkan pada sensus 1990. Pada waktu kalkulasi ini selesai (April 2005), data enumerasi sensus Timor-Leste pada 2004 hanya tersedia terpisah-pisah berdasarkan tingkat subdistrik, tapi tidak berdasarkan *suco* (desa) atau *aldeia*.^{*} Patut dicatat bahwa penyesuaian beban statistika 1990-2004 tidaklah memengaruhi jumlah keseluruhan beban, yang dipatok pada jumlah rumahtangga yang ada pada 2004. Penyesuaian beban ini memengaruhi sebanyak apa rumahtangga di tempat-tempat yang berbeda memengaruhi proyeksi data.

143. Dua subdistrik yang terdaftar pada 1990 tidaklah terdaftar pada hasil sensus 2004: Fatumaca di Baucau menjadi bagian dari subdistrik Baucau, dan di Oecussi, Pante Macassar B dimasukkan ke dalam Pante Macassar. Untuk kedua subdistrik ini, jumlah rumahtangga pada 2004 diperkirakan dengan menggunakan proporsi rumahtangga di dalam wilayah subdistrik yang menyerap dan terserap pada 1990 dikalikan dengan total rumahtangga di subdistrik yang menyerap di tahun 2004.

144. Walaupun jumlah total rumahtangga 2004 tersedia dari sensus pada tingkat subdistrik, RMS memiliki terlalu sedikit respons pada tingkat subdistrik untuk dapat memperkirakan beban atas subdistrik untuk memiliki data yang mencukupi (29 dari 59 subdistrik sampel memiliki kurang daripada 20 respons). Maka, beban

* Lihat <http://dne.mopf.gov.tp> untuk data sensus.

statistika 1990 dicocokkan pada jumlah total distrik 2004 dengan menggunakan perhitungan berikut:

- $\text{distrik_penyesuaian} = (\text{Total RT di tahun 2004 di distrik ini}) / (\text{Total 1990 beban di distrik ini})$
 $\text{pps_beban_2004} = \text{pps_beban_1990_penyesuan_kasar} * \text{distrik}$

145. Dengan memaksakan beban statistika untuk dicocokkan dengan jumlah rumahtangga distrik pada sensus 2004, beban statistika dinormalisasikan untuk dijumlahkan ke total rumahtangga pada 2004 (194.943). Kesalahan-kesalahan terdapat dalam hasil diperhitungkan dengan menggunakan modul survei standar Strata.⁹ Modul-modul ini menggunakan variabel desain survei (stratum, unit sampling primer, dan beban sampling) untuk membuat estimasi beban dari total dan perkiraan seri Taylor dari kesalahan sampling. Estimasi kesalahan ini mengambil sampling acak dengan beban sampling yang tidak sama. Asumsi ini konservatif (yaitu, ia akan cenderung untuk menyepelekan kesalahan sampling) dengan mempertimbangkan beban statistika yang dihitung dengan metode PPS yang dijelaskan sebelumnya.¹⁰ File-file data elektronik yang digunakan untuk kalkulasi-kalkulasi ini tersedia di <http://www.hrdag.org/timor>

Penentuan tanggal RMS untuk analisa pemindahan

146. Survei ini menanyakan kepada responden kapan mereka pindah dari setiap lokasi selama periode 1974-1999. Ketika para responden tidak yakin akan tanggal pasti dari waktu pindah mereka, sering mereka mengidentifikasi tahun pindah mereka dengan titik tertentu dalam siklus pertanian atau apakah itu adalah musim kering atau hujan. Untuk setiap tanggal parsial atau musiman ini, kami menentukan pemindahan ke dalam kuartal di mana masa atau musim itu terjadi. Jika identifikasi tanggal parsial dapat terjadi di dalam lebih daripada satu kuartal, ia ditetapkan secara acak ke dalam satu kuartal. Dari 2.024 proses pindah yang diartikan oleh responden sebagai kejadian pemindahan, 76,6% setidaknya-tidaknya diidentifikasi ke dalam kuartal, dan 15,7% lainnya diidentifikasi atas musim. Hanya 7,7% kejadian pemindahan diidentifikasi atas tahun tanpa menyebutkan bulan.

Penyesuaian beban RMS untuk perkiraan angka kematian

147. Kalkulasi beban statistika mengasumsi bahwa kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh setiap rumahtangga hanya bisa dilaporkan oleh rumahtangga tersebut. Asumsi ini ialah hasil dari beban yang merupakan resiprokal dari probabilitas *sampling* untuk setiap rumahtangga. Karena itu, apabila ada lebih daripada satu rumahtangga yang dapat memberikan informasi tentang sebuah kematian tertentu, probabilitas *sampling* murni untuk kematian tersebut lebih besar dari probabilitas untuk satu rumahtangga. Kematian yang dilaporkan oleh responden survei melanggar asumsi laporan-tunggal-rumahtangga karena untuk setiap kematian, mungkin ada lebih daripada satu rumahtangga yang dapat memberi laporan tentang kematian

tersebut. Di antara 5.402 jumlah total kematian yang dilaporkan oleh responden, 545 dilaporkan lebih daripada satu kali (laporan yang terduplikasi ini diidentifikasi dan dikeluarkan sebelum proses perkiraan). Duplikasi laporan yang terimplisit di dalam perkiraan beban survei diubah dengan menyesuaikan beban dengan cara yang dijelaskan di bawah ini.

148. Sebelum beban survei dapat digunakan untuk memperkirakan angka kematian total, angka tersebut harus disesuaikan untuk menghitung jumlah rumahtangga yang merupakan responden potensial untuk setiap kematian. Yaitu, untuk setiap kematian, berapa anggota keluarga yang selamat sampai 2003 untuk menjadi responden potensial dalam survei ini? Banyak informasi yang dibutuhkan untuk perhitungan ini tersedia dalam survei ini karena anggota keluarga responden juga adalah anggota keluarga almarhum/almarhumah. Jumlah anggota keluarga yang selamat dari setiap korban D dikalkulasi berdasarkan anggota keluarga yang dilaporkan oleh responden R dengan menggunakan aturan-aturan sebagai berikut:

- Jika D adalah orangtua dari R , jumlah anggota keluarga yang diharapkan selamat pada 2003 adalah penjumlahan dari:
 - » Dianggap bahwa orangtua dari D adalah 25 tahun lebih tua dari D (atau 50 tahun lebih tua dari R , jika usia D tidak dilaporkan); gunakan probabilitas selamat kondisional spesifik-umur (yang dikalkulasi dari survei ini) untuk memperkirakan jumlah orangtua yang diharapkan masih hidup pada 2003
 - » Hitung saudara-saudara kandung R sebagai anak-anak dari D
 - » Dengan rata-rata terdekat tingkat kesuburan total adalah 5 sebelum 1975, dianggap bahwa D mempunyai empat saudara dengan usia masing-masing (-4, -2, +2, +4) tahun dari usia D (jika usia D hilang, pasang usia D terhadap usia $R + 25$), hitung usia saudara kandung pada 2003, dan kalikan masing-masing dengan kemungkinan bersyarat untuk selamat sampai usia tersebut, dan tambahkan keempat saudara kandung itu
- Jika D adalah seorang saudara dari R
 - » Orangtua D adalah orangtua R , langsung hitung orang yang selamat
 - » Saudara R adalah saudara D , langsung hitung orang yang selamat

149. Dianggap bahwa D mempunyai jumlah anak dewasa yang selamat yang sama dengan R .

- Jika D adalah anak dari R
 - » R dan pasangannya adalah orangtua, langsung hitung orang yang selamat
 - » Anak-anak dewasa dari R adalah saudara-saudara kandung D , langsung hitung orang yang selamat
 - » Dianggap tidak ada anak dewasa yang selamat dari D .

150. Kalkulasi ini menghasilkan anggota keluarga dewasa yang diperkirakan selamat untuk setiap D , juga menunjukkan siapa dari anggota-anggota keluarga yang selamat ini tinggal dalam rumahtangga R , yang siapa yang tinggal di rumahtangga yang lain.

151. Untuk mengonversi anggota keluarga dewasa yang diperkirakan selamat dari D ke dalam sebuah penyesuaian untuk beban sampling, jumlah anggota keluarga harus dikonversi ke dalam sebuah jumlah perkiraan rumahtangga di mana anggota keluarga tersebut tinggal. Terdapat kira-kira 0,5 anggota keluarga D (selain R) tinggal di rumahtangga R . Anggap bahwa rumahtangga lain di mana anggota keluarga D tinggal mempunyai jumlah pemsatan anggota keluarga per rumahtangga yang sama dengan rumahtangga R (yaitu 1,5 anggota per rumahtangga). Maka, apabila D mempunyai L anggota keluarga yang selamat yang tinggal di luar rumahtangga R , maka ada $a = 1 + L/1,5$ rumahtangga yang dapat memberikan informasi tentang D . Beban survei yang disesuaikan untuk kemungkinan laporan berganda atas D dengan membagi setiap beban *sampling* D dengan faktor ini, a . Kalkulasi ini mengasumsikan bahwa rumahtangga responden potensial lainnya ada dalam kluster yang sama dengan R , atau bahwa mereka ada dalam kluster dengan kemungkinan sampling yang sama dalam kluster.

Analisis sensitivitas terhadap asumsi-asumsi dalam pengukuran kembali angka kematian (*mortality re-weighting*)

152. Ada sejumlah asumsi dalam pencocokan beban untuk perkiraan angka kematian, antara lain sebagai berikut:

- Perbedaan periode antara generasi-generasi (diasumsikan 25 tahun)
- Jumlah saudara kandung yang dimiliki orang tua responden (diasumsikan empat)
- Jarak kelahiran saudara kandung orang tua (diasumsikan dua tahun)
- Jumlah anak dewasa yang dimiliki saudara kandung responden (diasumsikan setara dengan anak-anak responden).

153. Asumsi-asumsi ini dites dengan menggunakan variasi-variasi berikut, dan total angka kematian tahunan dikalkulasi:

- Penjarakan antar-generasi bervariasi antara 18 dan 30 tahun
- Jumlah saudara dari orangtua responden diasumsikan telah bertambah menjadi enam
- Jarak kelahiran meningkat menjadi lima tahun antarsaudara
- Jumlah anak dewasa yang dimiliki saudara responden diasumsikan menjadi dua kali lipat dari anak-anak responden

154. Untuk setiap varian perkiraan, total tahunan diuji (dengan menggunakan *two-mean t-test*) terhadap model utama. Tidak satu tahun pun di setiap model varian yang berbeda secara penting pada $p < 0,05$. Nilai p minimum adalah 0,13, dan itu

adalah sebuah *outlier*: nilai terendah kedua dari p adalah 0,23. Karena itu, perkiraan ini tidak sensitif secara mendasar terhadap asumsi mengenai struktur keluarga.

155. Meskipun perkiraan-perkiraan ini kaku terhadap asumsi-asumsi tentang struktur keluarga yang digunakan untuk mengestimasi jumlah anggota keluarga yang selamat yang dapat memberikan informasi tentang D , magnitudo dari yang diperkirakan sensitif terhadap model yang digunakan untuk mentransformasi perkiraan anggota keluarga yang selamat untuk memperkirakan rumahtangga yang mengandung anggota keluarga. Perkiraan jumlah anggota keluarga yang selamat adalah L , dan perkiraan jumlah rumahtangga yang mempunyai anggota keluarga dari almarhum/almarhumah D , merupakan a , adalah $a = 1 + L/1,5$. Denominator 1,5 didapatkan dari rata-rata jumlah anggota keluarga untuk D (termasuk R) yang hidup di rumahtangga R (0,5). Memvariasikan rata-rata ini dari 0 sampai 3 (diasumsikan 1-4 anggota keluarga dewasa yang selamat per rumahtangga), meragamkan perkiraan hasil dari kematian total yang diperkirakan (oleh semua penyebab) dari -14.2% ke +19.6%. Dampak dari meragamkan model ini berkurang sepanjang waktu, dengan variasi terbesar ditemukan pada awal tahun 1972-1975 (-21%, +26%) dan variasi terkecil ditemukan pada tahun-tahun yang lebih kemudian yaitu 2001- 2003 (-11%, +16.2%). Pengurangan ini konsisten sepanjang waktu.

156. Dengan adanya jumlah yang konstan dari anggota keluarga yang selamat, sedikit saja anggota keluarga yang selamat per rumahtangga sudah dapat berarti bahwa lebih banyak kemungkinan rumahtangga yang dilaporkan, bahwa ada kemungkinan perkiraan sampel yang tinggi per kematian yang dilaporkan, dan bahwa beban sampel per kematian yang dilaporkan yang rendah, dan karenanya perkiraan total kematian lebih rendah; lebih banyak orang dewasa per rumahtangga yang membalikkan logika ini.

157. Meskipun total perkiraan bervariasi dengan perubahan-perubahan dalam model-model yang mentransformasikan anggota-anggota keluarga ke dalam rumahtangga-rumahtangga, polanya tetap sama. Koefisien korelasi untuk model utama ke model-model rendah (0) dan tinggi (3) di atas masing-masing adalah 0,99. Meskipun model anggota keluarga-per-rumahtangga memang memengaruhi magnitudo total dari kematian-kematian yang diperkirakan, model ini tidak memengaruhi pola-pola perkiraan sepanjang waktu.

Multiple System Estimation (MSE): motivasi dan teori

158. Analisis survei bersifat konservatif dalam pengertian bahwa analisa tersebut mengoreksi kemungkinan laporan berganda dengan mencocokkan kematian di seluruh rumahtangga, dan karena ada penyesuaian terhadap beban sampling yang didasarkan pada perkiraan jumlah rumahtangga yang dapat memberikan informasi tentang setiap kematian. Walaupun sejumlah kematian dapat saja dilaporkan oleh beberapa rumahtangga, ada juga kematian-kematian lain yang terjadi selama 1974-1999 di mana tidak ada anggota keluarga yang selamat pada 2003. Jika seluruh anggota keluarga meninggal selama periode mandat Komisi, mungkin saja tidak

ada anggota keluarga kolinear yang dapat memberikan informasi pada 2003. Karena keterbatasan ini, sebuah metode pengganti untuk memperkirakan total kematian dapat saja melakukan pengecekan pada survei yang diperkirakan.*

159. MSE menggunakan beberapa daftar populasi yang dikumpulkan secara terpisah yang tidak lengkap. Daftar-daftar ini mengidentifikasi kecocokan elemen-elemen yang sama sepanjang daftar-daftar itu untuk dapat memperkirakan jumlah elemen yang hilang dari seluruh daftar. Dalam proyek ini, kematian-kematian yang didokumentasikan dalam HRVD, RMS, dan GCD dicocokkan sepanjang ketiga sistem dengan menggunakan nama, tanggal kematian, lokasi kematian dan tanggal lahir.

160. Bentuk paling dasar dari teknik ini adalah *capture-tag-recapture*, yang menggunakan hanya dua daftar.

161. Penjelasan teknis tentang bagaimana sebuah perhitungan akan anggota yang tidak diketahui dari populasi dapat diperkirakan adalah sebagai berikut. Anggap saja ada kasus dari dua proyek P1 (sebuah daftar individu-individu A) dan P2 (sebuah daftar individu-individu B). Ada individu-individu M yang cocok di sepanjang daftar, dalam sebuah universe total individu-individu N (N tidak diketahui). Jika semua orang dalam universe N mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul dalam Daftar 1, maka kemungkinan seorang individu tertentu dilaporkan oleh P1 adalah:

$$Pr(\text{terdapat dalam daftar 1}) = \frac{A}{N}$$

162. Demikian juga, jika semua orang dalam universe N mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul dalam Daftar 2, maka kemungkinan seorang individu tertentu dilaporkan oleh P2 adalah:

$$Pr(\text{terdapat dalam daftar 2}) = \frac{B}{N}$$

163. Kemungkinan seorang individu tertentu terdapat/tertangkap dalam kedua daftar adalah

$$Pr(\text{terdapat dalam daftar 1 dan daftar 2}) = \frac{M}{N}$$

164. Menurut definisi, kemungkinan dari sebuah peristiwa mengandung dua peristiwa yang terpisah adalah hasil dari kemungkinan independen itu. Kerena itu,

$$Pr(\text{terdapat dalam daftar 1 dan 2}) = Pr(\text{terdapat dalam daftar 1}) \times Pr(\text{terdapat dalam daftar 2})$$

Di mana $\frac{M}{N} = \frac{A}{N} \times \frac{B}{N}$: dengan persamaan ini, kita memperoleh jawaban untuk M . Dengan mengatur ulang elemen-elemen persamaan ini, kita memperoleh:

* Penjelasan ini sesuai P Ball, J Asher, D Sulmont, D Manrique, "How many Peruvians have died? An estimate of the total number of victims killed or disappeared in the armed internal conflict between 1980 and 2000", a report to the Peruvian Truth and Reconciliation Commission. Washington, DC: AAAS. 28 August 2004. tersedia online pada <http://shr.aaas.org/hrdag/peru>.

$$\frac{M}{2} = \frac{\cdot B}{2}$$

Dan kemudian dikalikan dengan N ,

$$N = \frac{\cdot}{N}$$

Dikalikan lagi dengan $M^{\circ} = \circ B$, dan akhirnya dibagi dengan M , menghasilkan

$$N = \frac{\cdot}{M}$$

Catat bahwa dalam persamaan terakhir, jumlah kematian total N dapat diperkirakan dengan menggunakan total dari A dan B dan dari pencocokan antara mereka, M .

165. Ada banyak asumsi terimplisit dalam solusi ini. Sebagai contoh, tidak satu pun daftar yang mempunyai perorangan yang dilaporkan dua kali dan bahwa pencocokan antardaftar bersifat akurat. Dalam proyek ini kedua asumsi ini dikendalikan selama pengolahan data sebagaimana dijelaskan dalam bagian pencocokan.

166. Asumsi lain yang inheren dalam model *capture-tag-recapture* lebih sulit ditangani. Pertama, metode ini mengasumsikan bahwa individu-individu tidak memasuki atau keluar dari semesta (*universe*) ini selama proses penciptaan daftar-daftar itu, dan kedua bahwa daftar-daftar ini diseleksi secara acak dari populasi. Dalam proyek dokumentasi hak asasi manusia, asumsi pertama biasanya menjadi irrelevant karena dokumentasi terjadi secara retrospektif. Asumsi kedua tidak mungkin memuaskan, dan harus digantikan oleh asumsi bahwa perkiraan itu kaku terhadap proses-proses seleksi.

167. Asumsi yang lain adalah bahwa daftar itu independen, yaitu, bahwa kemungkinan bahwa seorang individual ada dalam daftar kedua adalah independen dari kemungkinan bahwa individual itu terdapat dalam daftar pertama. Asumsi terakhir adalah homogenitas: bahwa individu yang membentuk universe semuanya mempunyai kemungkinan yang sama untuk tertangkap dalam daftar.

168. Jika satu saja dari asumsi-asumsi ini terganggu, metode *capture-tag-recapture* tidak akan menghasilkan sebuah estimasi yang memadai tentang besarnya populasi total. Jika ada lebih daripada dua daftar dengan informasi yang memadai, masalah ketergantungan atau heterogenitas sering dapat diatasi melalui spesifikasi dan seleksi atas model-model yang tepat. Namun, dalam data untuk HRVD, RMS, dan GCD, hanya ada dua sistem yang dapat digunakan (RMS-GCD untuk kematian karena lapar atau kesakitan, dan HRVD-GCD untuk pembunuhan).⁷ Pada dirinya

* Aplikasi awal dari estimasi sistem berganda terhadap estimasi demografis adalah oleh C Chandra Sekar dan W Edwards Deming, "On a Method of Estimating Birth and Death Rates and the Extent of Registration," *Journal of the American Statistical Association*, March 1949. Sebuah diskusi menyeluruh tentang estimasi untuk pendekatan dual system dan kesalahan kalkulasi yang mungkin berhubungan tersedia dalam Yvonne M M Bishop, Stephen E Fienberg dan Paul H. Holland. *Discrete Multivariate*

sendiri perkiraan-perkiraan ini tidak akan memadai, tetapi dalam kombinasi dengan perkiraan RMS, perkiraan-perkiraan ini menyediakan informasi tambahan yang bermanfaat.

Mengalokasikan GCD menurut jenis kematian

169. Data kuburan tidak memasukan cara kematian. Terdapat 89.894 kubur dengan setidaknya-tidaknya sebuah inisial awal (atau nama), sebuah nama belakang dan sebuah tahun antara 1972 dan 2003. Ada sejumlah 7.117 cocok baik dengan HRVD atau dengan RMS (atau keduanya), dan melalui kecocokan ini, cara kematian dapat diketahui dari catatan tentang cara yang cocok dengan kematian. Sisanya 82.717 catatan GCD perlu dialokasikan ke dalam empat kategori cara kematian (pembunuhan, kematian karena kelaparan atau kesakitan, kematian Petempur, dan kematian lainnya). Dari RMS, proporsi kematian tahunan menurut keempat jenis ini ditunjukkan dalam tabel di bawah. Catat bahwa proporsi ini tidak mengikutsertakan kematian di mana cara kematian tidak diketahui (204 dari 3,235 kematian yang dilaporkan dalam RMS antara 1969 dan 2004 mempunyai cara kematian yang tidak diketahui).

| Periode | Pembunuhan | Kelaparan/Kesakitan | Petempur | Lain-lain |
|--------------------|------------|---------------------|----------|-----------|
| 1972 - 1974 | 0,9% | 95,9% | 0,0% | 3,2% |
| Marjin kesalahan | 1,8% | 5,1% | 0,0% | 4,9% |
| 1975-1982 | 11,2% | 83,0% | 4,4% | 1,4% |
| Marjin kesalahan | 4,7% | 5,1% | 2,5% | 0,6% |
| 1983-1998 | 5,5% | 86,5% | 0,7% | 7,2% |
| Marjin kesalahan | 2,5% | 3,7% | 0,6% | 2,5% |
| 1999 | 16,2% | 83,0% | 0,4% | 0,4% |
| Marjin kesalahan | 10,2% | 10,2% | 0,8% | 0,8% |
| 2000-2003 | 3,5% | 86,9% | 0,8% | 8,9% |
| Marjin kesalahan | 3,1% | 6,5% | 1,6% | 4,9% |
| Total | 8,3% | 85,1% | 2,4% | 4,3% |
| Marjin kesalahan | 2,7% | 3,1% | 1,2% | 1,2% |

170. Proporsi ini digunakan untuk mengalokasikan catatan GCD yang belum tercocokkan ke dalam cara khusus kematian untuk digunakan di dalam kalkulasi MSE untuk setiap tahun: proporsi dari periode ini yang mengandung setiap tahun

.....
Analysis: Theory and Practice. Cambridge, MA: MIT Press. 1975. Untuk komentar tentang penggunaan metode-metode ini dalam analisis hak asasi manusia, lihat Fritz Scheuren, "History Corner," *The American Statistician*, Februari 2004

digunakan mengalokasikan kematian GCD dalam tahun itu. Marjin kesalahan dari alokasi dimasukkan dalam kesalahan yang diperkirakan untuk perkiraan MSE.

Analisis sensitivitas hilangnya pengetahuan sosial: penyesuaian-penyesuaian untuk perkiraan yang terlalu rendah

171. Survei ini menanyakan kepada responden tentang kematian orangtua, saudara kandung, atau anak-anak mereka. Namun, beberapa kematian tidak menyisakan orangtua, saudara kandung, maupun anak-anak tetap hidup ketika survei ini dilaksanakan pada tahun 2004. Jika kematian-kematian telah terjadi lama di waktu lalu, bahkan anak-anak dari orang yang mati juga mati semuanya, tidak ada yang bisa melaporkan kematian-kematian tersebut. Dalam kasus lain keluarga yang kecil dapat saja menderita kematian semua anggota keluarga, sehingga tak seorangpun yang selamat untuk melaporkan kematian-kematian tersebut. Karena survei ini memperkirakan angka (atau tingkatan) kematian di masa lalu, perkiraan yang terlalu rendah yang merupakan akibat dari hilangnya pengetahuan sosial tentu saja menjadi sangat hebat. Namun, bahkan dalam waktu yang belum terlalu lama (sebagai contoh, di tahun 2003 karena survei dilakukan tahun 2004), adalah tidak mungkin untuk mendokumentasikan sejumlah kematian yang tidak mempunyai seorang pun yang selamat. Sebagai contoh, orang-orang yang tidak mempunyai orangtua, saudara kandung, atau anak-anak, yang meninggal di tahun 2003 tidak dapat dilaporkan dalam survei ini.

172. Tingkat kematian kasar (per 1.000 orang) adalah sebuah perkiraan tentang berapa banyak orang meninggal, secara total, per tahun. Tingkat kematian kasar ini adalah standar demografik dan indikator kesehatan, yang biasanya diperkirakan dengan metode-metode tidak langsung dengan menggunakan catatan-catatan sensus. Untuk Timor-Leste, tingkat ini sulit diperkirakan karena kualitas data sensus tahun 1980 dan 1990 masih dipertentangkan.¹¹ CDR yang diperkirakan oleh Biro Amerika Serikat untuk Sensus bagi Timor-Leste ditunjukkan untuk tahun 1990-2004. Tingkat keseluruhan untuk Indonesia ditunjukkan dalam tahun 1983. Perkiraan yang ditunjukkan untuk tahun 1971 yang berasal dari pemerintah Indonesia mengklaim bahwa di seluruh Indonesia antara 1971 dan 1990, CDR menurun sampai 45%; perkiraan tahun 1971 yang ditunjukkan di sini adalah perkiraan 1990 untuk Timor-Leste digelembungkan oleh faktor ini. Suatu CDR yang sudah diperhitungkan juga ditunjukkan dengan secara linear disisipkan antara perkiraan tahun 1971 dan perkiraan tahun 1990-2004

173. Selain perkiraan CDR, CDR dari RMS Komisi juga ditunjukkan. Perkiraan ini adalah total perkiraan kematian dibagi dengan perkiraan populasi untuk tahun itu (dikalikan 1.000). Ada beberapa pengamatan yang dibuat mengenai grafik ini. Pertama, CDR yang diperkirakan oleh Biro Amerika Serikat adalah dalam interval yang dipercaya dari CDR yang diperkirakan oleh RMS yang dimulai pada 1993. Pada 2003 interval yang dipercaya dari RMS CDR (4,2 - 6,6) mengandung perkiraan Biro Amerika Serikat (6,4), sebagaimana ditunjukkan dalam grafik

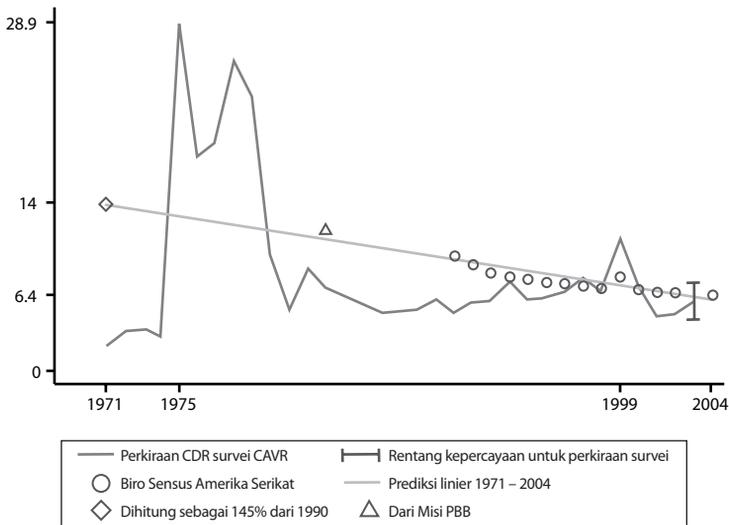
dengan adanya puncak pada akhir garis CAVR. Artinya, meskipun RMS sangat rendah memperkirakan tingkat kematian dalam tahun-tahun damai yang “normal” 1972-1974, sejak pertengahan 1990-an, RMS sesuai dengan hasil yang didapatkan melalui metode-metode tidak langsung yang digunakan oleh Biro Amerika Serikat. Pengamatan ini sesuai dengan gagasan bahwa perkiraan RMS mempunyai bias penurunan yang meningkat ke masa lalu.

174. Selama tahun-tahun di mana catatan-catatan historis menyatakan bahwa kematian yang sangat berlebihan terjadi, interpolasi linear CDR memperkirakan terlalu rendah kematian-kematian tersebut. Tahun-tahun ini termasuk tahun 1975-1979 dan 1999. Hal ini sesuai dengan arti literal dari kematian “berlebihan”. (Tidak ada CDR berbasis sensus yang diperkirakan untuk periode tahun 1975-1979). Melihat lebih jauh ke belakang, CDR berbasis survei menangkap sedikit penurunan dari total CDR (sebuah grafik yang sama dapat digambarkan untuk MSE yang diperkirakan atas waktu, dengan hasil yang sama).

175. Untuk menyesuaikan RMS, kematian-kematian yang tidak diketahui karena hilangnya pengetahuan sosial harus di perkiraan sepanjang waktu. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

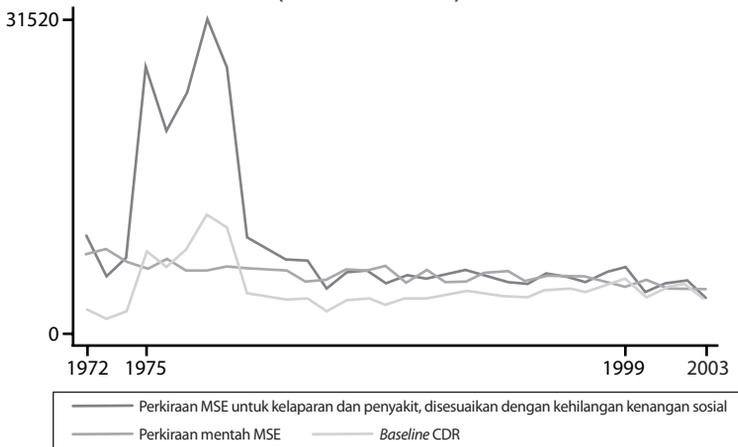
- Angka kematian diperkirakan oleh CDR dan populasi yang sudah diperhitungkan untuk setiap tahun diperkirakan (kematian-kematian CDR), ditunjukkan sebagai tingkat dalam bagan di bawah ini
- pecahan dari kematian-kematian CDR yang terjadi karena kelaparan dan kesakitan diperkirakan dengan menggunakan pecahan dari semua kematian yang dilaporkan dalam survei yang dikarenakan oleh kelaparan dan kesakitan (serupa dengan alokasi yang digunakan untuk data GCD yang tidak tercocokkan). Dalam survei ini, pecahan nilai rata-rata (dan nilai tengah) dari semua kematian (selama bertahun-tahun) yang dihubungkan dengan kelaparan dan kesakitan adalah 0,80, dan 50% dari semua tahun adalah antara jenjang 0,754 – 0,846;
- rasio kematian-kematian terestimasi terhadap kematian_CDR dikalkulasikan untuk tahun-tahun damai (1972-1974 dan 2002-2003); ini adalah pecahan dari “kematian-kematian yang dapat diingat” yang disebut “pecahan memori;”
- Pecahan memori untuk 1975-2001 diperkirakan oleh interpolasi linear dengan menggunakan persamaan berikut
- Pecahan memori teperkirakan (MSE) = $-39.1 + 0.0200 \cdot \text{tahun}$
- Pecahan memori terperkirakan (RMS) = $-43.9 + 0.0224 \cdot \text{tahun}$
- Pecahan memori untuk MSE berkisar dari 0.241-0.936, di mana untuk RMS, pecahan memori tersebut berkisar dari 0.228 sampai 0.846. Perbedaan ini mempunyai pengaruh yang luar biasa pada hasil/keluaran.
- Perkiraan tersesuaian dikalkulasi sebagai perkiraan asli dibagi dengan pecahan memori untuk setiap tahun.

Perkiraan kasar tingkat kematian bagi Timor-Leste



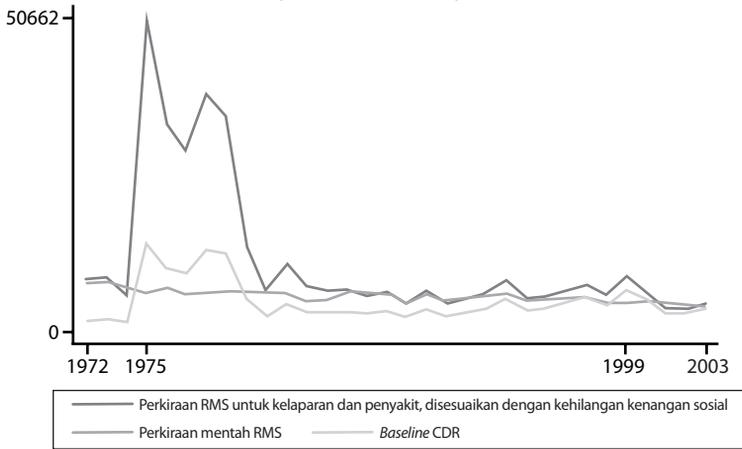
176. Perkiraan tersesuaian disampaikan di bawah ini dalam dua bagan di bawah ini. Catat bahwa dalam kedua grafik itu, perkiraan kasar dan perkiraan yang tersesuaian bertemu saat mendekati 2003. Dampak dari pecahan memori yang tinggi untuk MSE yang berhubungan dengan RMS jelas dalam perkiraan total kematian lebih daripada *baseline* CDR: perkiraan tersesuaian MSE adalah 104.000 kematian sedangkan perkiraan tersesuaian RMS adalah 183.300 kematian.

Perkiraan kematian total akibat kelaparan dan penyakit di Timor-Leste (berdasarkan MSE)



Perkiraan kematian total di atas *baseline* CDR = 103.904

**Perkiraan kematian total akibat kelaparan dan penyakit di Timor-Leste
(berdasarkan RMS)**



Perkiraan kematian total di atas baseline CDR = 183.332

177. Kedua perkiraan ini bergantung kepada sejumlah asumsi, termasuk asumsi tentang bentuk penurunan CDR sejak awal 1970-an sampai akhir 1990-an dan tentang sifat dari hilangnya memori sosial. Perubahan secara harus namun tidak linear dalam hilangnya memori sosial (entah melengkung naik atau melengkung turun) tidak akan mengubah perkiraan secara berarti. Namun, jika perkiraan terlalu rendah dalam MSE dan RMS yang disebabkan karena kehilangan memori sosial tidak berkelanjutan atau sebaliknya sangat berbeda untuk 1972-1974 yang berhubungan dengan tahun-tahun puncak 1975-1979, penyesuaian yang dilakukan di sini tidak akan mengoreksi secara memadai terhadap perkiraan yang terlalu rendah itu. Kedua model ini bergantung pada kalkulasi CDR dari data sensus 1980 dan 1990 dan metode-metode tidak langsung yang digunakan oleh Biro Sensus Amerika Serikat. Ada kesalahan sampling dan non-sampling yang tidak tergambar dalam grafik-grafik atau statistik, tetapi kesalahan-kesalahan itu tentu saja mendasar.

178. Namun, model-model ini mempunyai keuntungan menunjukkan bahwa dalam penyesuaian, perkiraan total kematian tahunan yang dikarenakan oleh kelaparan atau kesakitan lebih dekat kecocokannya dengan baseline kematian-kematian CDR untuk periode sebelum invasi (1972-1974) dan untuk periode 1984-1998.

179. Ada sejumlah alasan untuk memilih perkiraan MSE daripada perkiraan RMS. Meskipun RMS lebih dekat kecocokannya dengan perkiraan kematian-kematian CDR dalam tahun-tahun setelah pendudukan yang mendekati waktu damai, 2002-2003, MSE lebih dekat kecocokannya dengan perkiraan kematian total CDR sebelum pendudukan. Untuk tujuan perkiraan ini, periode yang paling relevan

adalah periode 1975-1979, dan pilihan perkiraan harus dituntun oleh kesesuaian yang terbaik segera sebelum periode ini. Alasan kedua untuk memilih MSE adalah bahwa MSE didasarkan pada data yang sangat lebih banyak dari RMS sendiri: MSE menggunakan data GCD di samping data RMS

180. Kesimpulan yang paling kuat yang dapat dibuat adalah bahwa perkiraan RMS dan MSE yang tak tersesuaian terlalu rendah. Bagian 6: Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia, menyediakan sebuah pemeriksaan terhadap dukungan statistik untuk temuan-temuan dalam hubungan dengan jumlah pelanggaran fatal selama periode mandat Komisi.

Catatan akhir

1. Regulasi UNTAET 2001/10 Seksi 13.1(a)(i).
2. Regulasi UNTAET 2001/10 Seksi 13.1(a)(i).
3. Regulasi UNTAET 2001/10 Seksi 13.1(a)(i).
4. Regulasi UNTAET 2001/10 Seksi 13.1(a)(ii).
5. Regulasi UNTAET 2001/10 Seksi 13.1(a)(iv).
6. Regulasi UNTAET 2001/10 Seksi 13.1(d).
7. Patrick Ball, *Who Did What to Whom Handbook*, dan Patrick Ball et al, *HR Database Design Methods*. Amerika Serikat.
8. Paul S Levy and Stanley Lemeshow, *Sampling of Populations*, Chapter 11, Wiley, New York, 1999.
9. Stata Corporation, *Stata Survey Data Reference Manual*, v. 8, College Station, TX: Stata. 2003.
10. Donna Brogan, "Sampling error estimation for survey data", dalam *Household Sample Surveys in Developing and Transition Countries*, United Nations Publication ST/ESA/STAT/SER.F/96, Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 2005.
11. lihat misalnya, Ben Kiernan, "The Demography of Genocide in Southeast Asia: The Death Tolls in Cambodia, 1975-79, and Timor-Leste, 1975-80." *Critical Asian Studies* 35:4 (2003), h. 585-597.

Lampiran 3:
Ringkas dakwaan

Ringkas dakwaan

3312 | Kesimpulan tuduhan/dakwaan menurut distrik

3312 | Aileu

- 3312 | 5-2001
- 3312 | 6-2001
- 3312 | 20-2003
- 3312 | 35-2003

3313 | Ainaro

- 3313 | 7-2001
- 3313 | 6-2003
- 3314 | 11-2004

3315 | Baucau

- 3315 | 33-2003
- 3316 | 10-2002

3316 | Bobonaro

- 3316 | 1-2000
- 3316 | 10-2000
- 3317 | 1-2001
- 3317 | 2-2001
- 3317 | 4-2001
- 3317 | 8-2001
- 3318 | 10-2001
- 3318 | 6-2002
- 3318 | 7-2002
- 3319 | 8-2002
- 3319 | 2-2003
- 3321 | 15-2003
- 3322 | 18-2003
- 3325 | 5-2004
- 3326 | 6-2004

3326 | Covalima

- 3326 | 5-2000
- 3326 | 13-2001
- 3326 | 1-2003
- 3327 | 7-2003
- 3327 | 8-2003
- 3327 | 9-2003

3330 | 14-2003
3332 | 34-2003
3332 | 1-2004
3332 | 4-2004
3334 | 7-2004
3334 | 8-2004
3334 | 9-2004

3334 | Dili

3334 | 14-2001
3335 | 16-2003
3335 | 17-2003
3335 | 2-2002
3336 | 11-2003
3336 | 12-2003
3336 | 13-2003
3337 | 24-2003
3339 | 25-2003
3339 | 27-2003
3339 | 28-2003
3339 | 29-2003
3340 | 10-2004
3340 | 10-2002

3340 | Ermera

3340 | 2-2000
3341 | 3-2000
3341 | 7-2000
3341 | 12-2000
3341 | 9-2002
3341 | 2-2004
3341 | 12-2004

3342 | Lautém

3342 | 9-2000
3343 | 3-2001
3343 | 10-2002
3344 | 12-2002

3345 | Liquiçá

3345 | 11-2001
3345 | 16-2001
3345 | 19-2001

3345 | 21-2001

3347 | 23-2003

3347 | Manatuto

3347 | 11-2002

3348 | Manufahi

3348 | 8-2000

3348 | 3-2002

3348 | 18-2001

3349 | 13-2004

3350 | 14-2004

3350 | Oecussi

3350 | 20-2001

3352 | 4-2002

3352 | 5-2002

3352 | 13-2002

3352 | 3-2003

3352 | 4-2003

3353 | 10-2003

3353 | 19-2003

3353 | 22-2003

3354 | 30-2003

3355 | 31-2003

3355 | 32-2003

3355 | Viqueque

3355 | 3-2004

3356 | Timor Barat

3356 | 11-2000

3356 | Dakwaan Nasional

3356 | 5-2003

Lampiran 3:

Ringkas dakwaan

Lampiran ini bukan merupakan bagian dari temuan Komisi melainkan merupakan rangkuman dari semua dakwaan yang disubmisikan kepada Panel Khusus Kejahatan Berat untuk disidangkan oleh Unit Kejahatan Berat. Regulasi UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor) 2000/11 memberikan yurisdiksi khusus kepada Unit Kejahatan Berat menyangkut kejahatan-kejahatan:

- pemusnahan
- kejahatan perang
- kejahatan terhadap kemanusiaan
- pembunuhan
- penyerangan seksual, dan
- penyiksaan

yang terjadi antara 1 Januari dan 25 Oktober 1999. Unit Kejahatan Berat berakhir pada Mei 2005 dengan berakhirnya misi UNMISSET (United Nations Assistance Mission in East Timor) saat PBB menarik dukungannya. Komisi menerbitkan rangkuman ini sebagai sebuah Annex dari Laporan Akhir Komisi dalam upaya menyampaikan secara utuh semua informasi yang relevan tentang mereka yang bertanggung jawab terhadap kejahatan berat yang dilakukan di Timor-Leste, dan dengan ini membantu menjawab masalah impunitas terhadap kasus-kasus ini yang masih berkelanjutan. Dakwan-dakwaan ini diatur secara alfabetis menurut distrik.

Kesimpulan tuduhan/dakwaan menurut distrik^{*}

Aileu[†]

5-2001

Gaspar Leki

Seorang serdadu TNI, didakwa membunuh satu orang di Aileu pada 9 September 1999. Dia dihukum oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat karena menyebabkan kematian satu orang akibat ketidakpedulian.

6-2001

Agusto dos Santos

Seorang anggota milisi AHI, didakwa membunuh salah satu orang di Aileu (Aileu) pada 4 September 1999. Dia dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

20-2003

Domingos A Carlos

Sersan Babinsa Aissirimou (Aileu, Aileu)

Carlos Soares

Anggota milisi AHI, dan

Almeida Martins

Anggota milisi AHI

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan karena pembunuhan dua orang pada 6 September 1999 dekat Desa Aissirimou (Aileu). Para tertuduh kabarnya masih hidup bebas di Indonesia.

35-2003

Adolfo Amaral

Seorang serdadu TNI didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan karena pembunuhan satu orang dan percobaan pembunuhan orang lain pada 6 September 1999 di Kotolau (Laulara Aileu). Dia kabarnya masih hidup bebas di Indonesia.

^{*} Penomoran terhadap rangkuman dakwaan ini adalah penomoran kasus dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dan bukan penomoran dari dakwaan Unit Kejahatan Berat. Beberapa dakwaan ditarik kembali oleh Jaksa Penuntut di depan persidangan dan dakwaan-dakwaan ini tidak dimasukkan di sini.

[†] Ejaan nama tempat dan aksentuasi nama orang sesuai dengan Pedoman Penulisan CAVR dan berbeda di sana-sini dengan nama-nama tempat dan orang dalam dakwaan-dakwaan Unit Kejahatan Berat

Ainaro

7-2001

Anigio de Oliveria

Seorang anggota milisi Mahidi, didakwa untuk pembunuhan satu orang di Ainaro, pada 5 September 1999. Dia dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

6-2003

Cancio Lopes de Carvalho

Komandan Umum milisi Mahidi

Nemezio Lopes de Carvalho

Petugas intelijen milisi Mahidi, Koordinator milisi Mahidi, Ainaro.

Orlando Baptista

Komandan Kompi B milisi Mahidi

Celestinho Barros

Anggota milisi Mahidi

Bernardo Barros

Anggota milisi Mahidi

Francisco Mendez

Anggota milisi Mahidi

Fernando Lopes

Anggota milisi Mahidi

João Baptista

Anggota milisi Mahidi

Martinho Lopes

Anggota milisi Mahidi

Francisco Atelulo (alias Chico Zumalai)

Anggota milisi Mahidi

Manuel Gomes

Komandan Kompi A, milisi Mahidi

Felismino Lopes

Anggota milisi Mahidi

José Lokomau (alias Gadapaksi)

Komandan pleton milisi Mahidi

José Beldasi

Komandan pleton milisi Mahidi

Adriano Lopes Titimau

Anggota milisi Mahidi

Afonso Caldas

Anggota milisi Mahidi

Gilverto Lopes

Anggota milisi Mahidi

Marcelo Gomes

Anggota milisi Mahidi, dan

Marcelino Beremali

Komandan pleton milisi Mahidi.

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan dua orang dan tindakan tidak berperikemanusiaan lain pada atau kira-kira pada 3 Januari 1999 di Manutasi (Ainaro)
2. pembunuhan satu orang pada 5 September 1999 di Cassa (Ainaro, Ainaro)
3. pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 12 September 1999 di Cassa (Ainaro, Ainaro)
4. pembunuhan 11 orang, dan tindakan tidak berperikemanusiaan lain terhadap enam orang. Tindakan penyiksaan terhadap satu orang dan deportasi serta penghancuran harta benda penduduk sipil di Maununo pada 23 September 1999 di Maununo (Ainaro).

Semua tertuduh kabarnya masih bebas di Indonesia.

11-2004

Cesario Tilman

Seorang serdadu TNI dan anggota milisi Mahidi, dan

Letnan Julius Adu

Komandan Koramil, sub-distrik Hatu Udo, Ainaro

Didakwa kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan satu orang pada 12 September 1999 di Hatu Udo (Ainaro)
2. pembunuhan empat orang pada 19 September 1999 di Hatu Udo (Ainaro)
3. pendeportasian penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya dari Ainaro antara 5 September dan 30 Oktober 1999
4. tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara Februari dan 30 Oktober 1999.

Tuduhan tindakan kekerasan termasuk penahanan ilegal dan pemukulan, pendeportasian, pembunuhan dan penghancuran harta benda, pembunuhan lima orang, pemenjaraan, pendeportasian paksa, dan tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya pada September dan Oktober 1999 di Ainaro.

Para tertuduh kabarnya masih bebas di Indonesia.

Baucau

33-2003

Richard Hutadjulu

Letnan Kolonel, Komandan Kodim Distrik Baucau

Karel Polla

Kapten, Kepala Staf dan Wakil Komandan Kodim Distrik Baucau

Irwan (LNU)

Sersan satu, seksi intelijen, Kodim 1628

Faustino do Santos

Sersan satu seksi intelijen Kodim 1628

Tomas Cardoso alias **Tomas Maurade**

Sersan dua, seksi intelijen, Kodim 1628

Manuel Ariate

Sersan dua, seksi intelijen Kodim 1628

Agustinho Soares

Kopral satu, seksi intelijen, Kodim 1628

Adelino Freitas

Prajurit satu, seksi intelijen Kodim 1628

Jeronimo Soares

Prajurit satu, seksi intelijen, Kodim 1628

Domingos Filipe

Prajurit dua seksi intelijen Kodim 1628, anggota Tim Saka

Domingos Alaguia

Anggota Kodim 1628

Joanico C. Belo

Komandan Tim Saka, Komandan PPI sector A, sersan satu Kopassus

Igidio Sarmento

Wakil Komandan PPI Sektor A, prajurit satu Kodim 1628

Celestino Morreira

Wakil Komandan Tim Saka Quelicai

Cosme Morreira

Wakil Komandan Tim Saka Quelicai

Virgilio Soares

Wakil Komandan Tim Saka Quelicai, dan

Cristiano Ximenes

pertahanan sipil [HANSIP] Indonesia

Didakwa kejahatan terhadap kemanusiaan untuk

1. pembunuhan tiga orang dan tindakan tidak berperikemanusiaan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 26 Maret 1999 di Baucau (Baucau)
2. pembunuhan satu orang dan tindakan tidak berperikemanusiaan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 27 Mei 1999 di Baucau (Baucau)
3. penyiksaan lima orang pada atau kira-kira pada 27 dan 28 Mei 1999 di Baucau (Baucau)
4. pembunuhan satu orang dan penghancuran harta benda penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Desa Abo, Aldeia Liri, dan Kota Quelicai (Baucau)
5. pembunuhan satu orang pada 11 September 1999 di Laga (Baucau)

Semua tertuduh kabarnya masih bebas di Indonesia.

10-2002

Mayor Jacob Djoko Sarosa

Komandan TNI Batalion 745, dan

Camilo do Santos

Komandan Pleton Batalion 745

Didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan 21 orang selama September 1999 di distrik-distrik Lautém, Baucau, dan Dili.
2. pemenjaraan tiga orang pada atau kira-kira pada 10 September 1999 di Fuiloro, Lospalos, Lautém
3. tindakan tidak berperikemanusiaan lain terhadap satu orang dan penahanan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 21 September 1999 di Becora (Dili)

Mereka kabarnya masih bebas di Indonesia.

Bobonaro

1-2000

João Fernandes

Seorang anggota milisi Dadurus Merah Putih didakwa membunuh satu orang pada 8 September 1999 di pos Polisi Maliana (Bobonaro). Dia dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

10-2000

Manuel G L Bere

Seorang anggota milisi Dadurus Merah Putih, didakwa untuk pembunuhan terhadap satu orang selama September 1999 di Maliana. Dia dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

1-2001

Francisco Pedro Geger

Seorang anggota milisi FIRMI, didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan, penyiksaan, dan tindakan tidak berperikemanusiaan lain terhadap delapan orang di benteng Balibó (Balibó) pada 6 September 1999, pembunuhan terhadap dua orang, dan percobaan pembunuhan terhadap satu orang pada 15 September 1999 di Batugade. Dia dihukum untuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

2-2001

Agusto A Tavares

Seorang anggota milisi Halilintar, didakwa dalam pembunuhan terhadap satu orang di Memo (Maliana) selama Agustus 1999. Dia dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

4-2001

Bambang Indra

Komandan Koramil TNI di Lolotoe Bobonaro

Francisco Noronha

Anggota milisi Kaer Metin Merah Putih

Sabino Goveia Leite

Kepala Desa Guda

João Franca da Silva

Komandan milisi Kaer Metin Merah Putih, dan

José Cardoso Ferreira

Komandan milisi Kaer Metin Merah Putih

Didakwa terhadap pembunuhan dan penyiksaan empat orang, pemerkosaan tiga orang, dan penahanan disertai tindakan kekerasan fisik, serta tindakan tidak berperikemanusiaan dan penyiksaan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Lolotoe, (Bobonaro) antara Mei dan September 1999.

Sabino Goveia Leite, João Franca da Silva, dan José Cardoso Ferreira dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Bambang Indra dan Francisco Noronha kabarnya masih bebas di Indonesia.

8-2001

Francisco dos Santos Laku

Seorang serdadu TNI, didakwa untuk pembunuhan satu orang pada 7 September 1999 di Balibó (Bobonaro). Dia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

10-2001

Lino de Carvalho

Anggota milisi Saka Loronmonu

Ruben Monteiro

G. Wakil Komandan milisi Saka Loronmonu, dan

Ruben Pereira Tavares

Komandan, milisi Saka Loronmonu

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap pembunuhan satu orang di Maudeku, Lotan, Batugade selama September 1999 dan tindakan tidak berperikemanusiaan lain terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya, dan dilakukan pada 14 April, 16 April, dan 7 Mei 1999.

Lino de Carvalho didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Dua terdakwa lainnya kabarnya masih bebas di Indonesia.

6-2002

Paulino de Jesus

Seorang serdadu TNI didakwa untuk pembunuhan satu orang dan percobaan pembunuhan orang lain pada atau kira-kira pada 10 September 1999 di Lourba (Bobonaro, Bobonaro). Panel Khusus untuk Kejahatan Berat menyatakan dia bersalah atas kedua dakwaan. Sidang naik banding membalikkan pernyataan bersalah ini. Dia sekarang kabarnya masih bebas di Indonesia.

7-2002

Salvador Soares

Anggota milisi Dadurus Merah Putih (DMP)

Sutrisno

Anggota TNI KODIM 1636

Assis Fontes alias Atzis Montes

Serdadu TNI

João Batista

Anggota milisi DMP

Vitalis Fernandes

Anggota milisi DMP

Marito L. Morreira

Anggota milisi DMP

José Soares

Anggota milisi DMP

Humberto Lopes

Komandan milisi DMP

Martinho Afonso

Anggota milisi DMP dan

Manuel

(LNU) (tidak ada afiliasi yang disebutkan)

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap dua orang dan penyiksaan satu orang pada 2 September 1999 di Raifun (Maliana, Bobonaro). Salvador Soares dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan di beberapa pengadilan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Para terdakwa yang lain kabarnya masih bebas di Indonesia.

8-2002

Paulo Goncalves

Komandan milisi Halilintar

Marcelino Leto

Wakil Komandan milisi Halilintar, dan

Rosalino Pires

Anggota milisi Halilintar

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pemerkosaan dan penyiksaan terhadap enam orang dan tindakan kekerasan terhadap tujuh orang di Atabae, Bobonaro, antara Februari dan September 1999. Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

2-2003

Burhanuddin Siagian

Komandan Kodim 1636, Maliana (Bobonaro)

Letnan Sutrisno

Kepala Intelijen TNI Kodim 1636

Assis Fontes

Sersan Mayor SGI TNI Kodim 1636

Mahalan Agus Salim

Komandan pos SGI TNI di Marco

Tito Leto Bere

Serdadu TNI, Cailaco

Yohanes Leodesi

Serdadu TNI, Cailaco

Guilherme Atusuri

Serdadu TNI, Cailaco

Haerola LNU

Komandan TNI, pos BTT Purugoa

Manuel Mau Bere

Serdadu TNI, Cailaco

Silvano Siga Mau

Serdadu TNI, Cailaco

Manuel Bere Lete

Serdadu TNI, Cailaco

Gustavão Soares

Serdadu TNI, Cailaco

Arlindo Bere Dasi

Serdadu TNI, Cailaco

Agustinho Lopes

Serdadu TNI, Cailaco

Manuel Lopes

Serdadu TNI

João Da Silva Tavares

Panglima milisi PPI Timor Timur

Jorge Tavares

Ketua FPDK, Bobonaro

Paulo Goncalves

Komandan milisi Halilintar, Bobonaro

Francisco V. Bili Ato

Wakil Komandan milisi Halilintar, Bobonaro

Feliciano Mau Bere

Anggota milisi Halilintar, Bobonaro

José Apalagi

Anggota milisi Halilintar, Bobonaro

Arcanzo Pereira

Anggota milisi Halilintar, Bobonaro

Carlito Gama

Anggota milisi Halilintar, Bobonaro

Adão Salsinha Babo

Komandan milisi Guntur, Cailaco

Flaviano Dasi Leto

Wakil Komandan milisi Guntur, Cailaco

Aparicio Miguel

Anggota milisi Guntur, Cailaco

Justinho Borges

Anggota milisi Guntur, Cailaco

Arnold Soares [alias Jamie]

Anggota milisi Guntur, Cailaco

Rui Bere Loe

Anggota milisi Guntur, Cailaco

Agustinho Bili Tael

Anggota milisi Guntur, Cailaco

João Coli

Anggota milisi DMP Maliana

Manuel Maia

Anggota milisi DMP Maliana

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk

1. pembunuhan, penyiksaan dan penahanan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 21 dan 22 Maret 1999 di Maliana (Bobonaro)
2. penyiksaan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 13 April 1999 di Maliana (Bobonaro)
3. penyiksaan dan tindakan melanggar hukum dengan penahanan ilegal atas penduduk yang tidak diketahui jumlahnya pada 12 April 1999 di Marco, Cailaco (Bobonaro)
4. penyiksaan lima orang dan pembunuhan tiga orang pada 12 April 1999 di Purugoa, Cailaco (Bobonaro)
5. pembunuhan empat orang pada atau kira-kira pada 12 April 1999 di Marco, Cailaco (Bobonaro)
6. pemindahan penduduk secara paksa dan tindakan tidak menyenangkan dengan penghancuran harta benda penduduk sipil di Cailaco (Bobonaro) antara 12 dan 20 April 1999
7. pembunuhan atau tindakan tidak menyenangkan dengan penahanan ilegal terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 19 April 1999 di Purugoa, Cailaco (Bobonaro)
8. pembunuhan dua orang pada atau kira-kira pada 19 April 1999 di Marco, Cailaco (Bobonaro)
9. pembunuhan dua orang pada atau kira-kira pada 20 April 1999 di Marco, Cailaco (Bobonaro)

Semua terdakwa kabarnya masih bebas di Indonesia.

15-2003

Lima tentara TNI didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pemerkosaan, penyiksaan, dan pendeportasian atau pemindahan paksa penduduk antara bulan Maret dan September di Timor Timur. Seluruh terdakwa kabarnya masih bebas di Indonesia [Beberapa perincian disembunyikan atas permintaan Satuan Kejahatan Berat demi melindungi para korban.]

18-2003

Burhanuddin Siagian

Letnan Kolonel TNI, Komandan Kodim 1636, Maliana

Bambang G. Supriyanto

Letnan Kolonel TNI, Komandan Kodim 1636, Maliana

Sutrisno

Letnan TNI, Kepala seksi Intelijen Kodim 1636, Maliana

M. Yusuf

Letnan TNI, Kepala Operasi Kodim 1636, Maliana

Rizal

Serdadu SGI, Maliana

Domingos do Santos

Sersan TNI, seksi intelijen Kodim 1636, Maliana

Julião Lopes

Sersan TNI, seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

Mau Muti

Sersan TNI, seksi intelijen Kodim 1636, Maliana

Manuel Lopes

Sersan TNI, seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

Frederico M Pires

Sersan TNI, seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

José Bere Laka

Seksi Intelijen TNI Kodim 1636 Maliana

Alvaro Mali

Sersan TNI, seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

Francisco Fernandes

Sersan TNI, seksi Intelijen KODIM 1636-01 Maliana

Miguel Soares

Sersan TNI, seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

José Simão

Sersan TNI, seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

Rue Bere Tali

Kopral TNI, Seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

Romeo da Silva

Kopral TNI, Seksi Intelijen Kodim 1636 Maliana

Domingos dos Santos de Carvalho

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Budi Susilo

Kapolres distrik Bobonaro

Clementino da Costa

Sersan Polisi, Polres Maliana

Guilherme do Santos

Bupati Distrik Bobonaro

João da Silva Tavares

Panglima milisi PPI Timor Timur

Jorge Tavares

Ketua FPKD distrik Bobonaro

Natalino Monteiro Goncalves

Komandan milisi Dadurus Merah Putih Maliana

Marcos Tato Mali

Wakil Komandan milisi Dadurus Merah Putih Maliana

Ruben Tavares

Komandan milisi Saka Loromonu Batugade

Ruben Monteiro Goncalves

Wakil Komandan milisi Saka Loromonu

João alias Laho

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Luis Cardoso

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Armindo Soares

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

António de Jesus

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Inacio da Conceição

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

João Coli

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Alfredo alias Mau

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Francisco Bere Masak

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Fernando (LNU)

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Jacinto LNU

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

João Baptista

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

João Kometa

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

José Lopes

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Luis Mali Dao

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Marito Morreira

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Mateus Monis

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Leoneto Martins

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Manuel Cansil

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Rui Kele

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Elias Pereira

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Afonso Davidson

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Leoneto Monis

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Mau Xesta

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Bernardino LNU

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Zerniah LNU

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Zeferino LNU

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

João do S Nunes

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Daniel LNU

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Baptista de Sousa

Anggota milisi Dadurus Merah Putih, dan

Aparicio Guterres

Anggota milisi Dadurus Merah Putih

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk beberapa tindakan yang dilakukan di Maliana selama 1999, secara spesifik:

1. penyiksaan satu orang pada 8 Mei 1999 di Lalebol, Bobonaro (Bobonaro)
2. pembunuhan dua orang pada atau kira-kira pada 15 Mei 1999 di dekat jembatan Nunura (Maliana, Bobonaro)
3. pembunuhan satu orang pada 18 Agustus 1999 di Buipira (Lahomea, Maliana, Bobonaro)
4. pembunuhan satu orang dan percobaan pembunuhan- satu orang lagi pada atau kira-kira pada 2 September 1999 di Maliana, Bobonaro
5. pembunuhan penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya dan percobaan pembunuhan atas dua orang pada atau kira-kira pada 8 September 1999 di pos Polres (Maliana, Bobonaro)
6. pembunuhan atas satu orang pada atau kira-kira pada 9 September 1999 di Mulau (Maliana, Bobonaro)
7. pembunuhan atas satu orang pada atau kira-kira pada 9 September 1999 di Genuhaan (Odomau, Maliana, Bobonaro)
8. pembunuhan atas satu orang pada atau kira-kira pada 13 September 1999 di Genuhaan (Odomau, Maliana, Bobonaro)
9. pembunuhan atas dua orang pada atau kira-kira pada 13 September 1999 di Akadiru Laran (Maliana, Bobonaro)
10. tindakan tidak menyenangkan terhadap penduduk sipil di distrik Bobonaro selama 1999

Aparicio Guterres

Dibebaskan dari seluruh tuntutan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dalam sidang yang terpisah.

Para terdakwa lain kabarnya masih bebas di Indonesia.

5-2004

Ruben Goncalves

Komandan Gabungan milisi Saka Loronmonu

Ruben Tavares

Komandan Gabungan milisi Saka Loronmonu

João Oliveira

Komandan milisi FIRMI, Balibó, Bobonaro

Joaquim Maia Pereira

Wakil Komandan milisi FIRMI, Balibó, Bobonaro

João da Silva Tavares

Panglima milisi PPI Timor Timur

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. penyiksaan dan pembunuhan satu orang pada 16 April 1999 di Batugade
2. pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 13 Mei 1999 di Batugade
3. penyiksaan dua orang pada 11 Mei 1999 di Balibó
4. tindakan tidak menyenangkan terhadap 38 penduduk sipil antara 2 dan 6 September 1999 di Balibó
5. penyiksaan 14 orang antara 2 dan 6 September 1999 di Balibó
6. pembunuhan delapan orang pada 6 September 1999 di Balibó
7. pembunuhan satu orang pada 7 September 1999 di Batugade
8. pembunuhan dua orang dan percobaan pembunuhan terhadap satu orang pada 15 September 1999 dekat Batugade

Semua terdakwa kabarnya masih bebas di Indonesia.

6-2004

Frans Tallo

Seorang Komandan Pleton Saka Loronmonu didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu penyiksaan atas satu orang dan pembunuhan 11 orang lainnya pada April, Mei, dan September 1999 di Batugade. Dia dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Covalima

5-2000

Yoseph Leki

Seorang anggota milisi Laksaur, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap empat orang di Salele dan hutan Wea pada 25 dan 26 Mei 1999. Ia telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

13-2001

Mercurious José de Deus

Seorang anggota milisi Laksaur didakwa untuk pembunuhan satu orang pada September 1999 di Fatumean, Distrik Covalima. Dia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

1-2003

Damião da Costa Nunes

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan karena pembunuhan tiga orang di Distrik Covalima antara Agustus dan September 1999. Dia kemudian dihukum atas dasar kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

7-2003

Joanico Gusmão

Seorang anggota milisi Laksaur didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk tindakan pembunuhan satu orang pada 5 September 1999 di Sukaer Laran (Suai, Covalima). Dia kemudian dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

8-2003

Miguel Mau

Didakwa untuk kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan empat orang dan tindakan kekerasan sembilan orang pada 23 April 1999 di Tilomar dan pembunuhan penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya pada 6 September 1999 di Gereja Avê Maria (Suai).

Dia kemudian dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat

9-2003

Egidio Manek

Wakil Komandan milisi Laksaur Distrik Covalima, anggota Gadapaksi

Maternus Bere

Komandan milisi Laksaur Suai

Pedro Teles

Komandan milisi Laksaur Fatululik

Hendrikus Mali

Komandan milisi Laksaur, Fatumean

Cosmas Amaral

Komandan milisi Laksaur, Fohorem

Alipio Gusmão alias **Alipio Mau**

Komandan Operasi milisi Laksaur, Leogore, kota Suai

Baltazar da Costa Nunes

Anggota milisi Laksaur

Domingos Mali alias **Bete Aloï**

Anggota milisi Laksaur

Illidio Gusmão

Anggota milisi Laksaur

Joaquim Berek alias **Berek Bot**

Anggota milisi Laksaur

Olivio Tatoo Bau

Anggota milisi Laksaur

Gabriel Nahak

Anggota milisi Laksaur

Americo Mali

Anggota milisi Laksaur, dan

Zito da Silva alias Zito Saek

Anggota milisi Laksaur

Didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan kepada penduduk sipil di distrik Covalima pada tahun 1999. Secara spesifik:

1. penyiksaan satu orang pada atau kira-kira pada 27 Januari 1999 di Uma Merah (Tilomar, Covalima)
2. penyiksaan terhadap tiga orang pada atau kira-kira pada 26 Februari 1999 di Uma Merah (Tilomar, Covalima)
3. penyiksaan satu orang pada atau kira-kira pada 14 April 1999 di Uma Merah (Tilomar, Covalima)
4. penyiksaan terhadap enam orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Desa Belulik Leten (Fatumean, Covalima)
5. penyiksaan terhadap empat orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Nikir (Raihun, Tilomar, Covalima)
6. penyiksaan terhadap sembilan orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Fatukmetan (Tilomar, Covalima)
7. penyiksaan satu orang pada atau kira-kira pada 26 April 1999 di Leogore (Suai, Covalima)
8. penyiksaan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 26 April 1999 di Leogore (Suai, Covalima)
9. penghancuran harta benda penduduk sipil Wetaba pada atau kira-kira pada 22 April 1999 di Wetaba (Raihun, Tilomar, Covalima)
10. penyiksaan terhadap sembilan orang pada atau kira-kira pada 30 April 1999 di Salele (Tilomar, Covalima)
11. penyiksaan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 24 April 1999 di Raihun (Tilomar, Covalima)
12. pelenyapan disengaja terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 19 April 1999 di Matai (Suai, Covalima)
13. pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 12 April 1999 di Suai (Covalima)
14. pelenyapan disengaja terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Caicoli (Tilomar, Covalima)
15. pembunuhan terhadap empat orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Raihun (Tilomar, Covalima)
16. pembunuhan satu orang dan percobaan pembunuhan terhadap satu orang lain pada atau kira-kira pada 13 Mei 1999 di Fatuloro (Fatululik, Covalima)

- 17.pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 28 Mei 1999 di hutan Uma Wesei (Suai, Covalima)
- 18.pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 28 Mei 1999 di Alastehen (Fatumean, Covalima)
- 19.pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 27 Agustus 1999 di Mota Ulun, Fatumean (Covalima)
- 20.penyiksaan terhadap dua orang dan tindakan tidak berperikemanusiaan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 5 September 1999 di Suai (Covalima)
- 21.penyiksaan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 17 September 1999 di Tilomar (Covalima)
- 22.pembunuhan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 4 September 1999 di Belulik Leten (Fatumean,Covalima)
- 23.pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 5 September 1999 di Debos (Suai, Covalima)
- 24.hukuman mati terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Gereja Avê Maria (Suai, Covalima)
- 25.penculikan satu orang pada atau kira-kira pada 6 September 1999 di Suai (Covalima)
- 26.pembunuhan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 6 September 1999 di Manekiik (Fatumean, Covalima)
- 27.pembunuhan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 7 September 1999 di Maukatar (Covalima)
- 28.pembunuhan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 7 September 1999 di Suai (Covalima)
- 29.tindakan kekerasan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 7 September 1999 di Suai (Covalima)
- 30.pembunuhan satu orang dan penculikan terhadap satu orang lain pada atau kira-kira pada 8 September 1999 di Suai (Covalima)
- 31.pembunuhan terhadap dua orang dan percobaan pembunuhan terhadap satu orang lain pada atau kira-kira pada 9 September 1999 di Suai (Covalima)
- 32.pembunuhan terhadap 14 orang pada atau kira-kira pada 12 September 1999 di Lactos (Fohorem, Covalima)
- 33.pembunuhan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 12 September 1999 di Kulit (Tilomar, Covalima)
- 34.tindakan kekerasan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 19 September 1999 di Alastehen (Fatumean, Covalima)
- 35.pembunuhan terhadap tiga orang dan tindakan tidak berperikemenusiaan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 25 September 1999 di hutan Wea, Covalima

- 36.pembunuhan terhadap dua orang pada atau kira-kira pada 26 September 1999 di hutan Wesei (Covalima)
- 37.pembunuhan terhadap satu orang pada atau kira-kira pada 26 September 1999 di hutan Wesei (Covalima)
- 38.pembunuhan terhadap tiga orang pada atau kira-kira pada 5 Oktober 1999 di hutan Laketo (Lookeu, Covalima)
- 39.pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 5 Oktober 1999 di Suai (Covalima)
- 40.pelenyapan disengaja terhadap tiga orang pada atau kira-kira pada 17 Oktober 1999 di Bora (Timor Barat, Indonesia)
- 41.pemeriksaan satu orang antara 6 September dan 15 Desember 1999 di dekat Wemasa (Timor Barat, Indonesia)
- 42.pendeportasian dan tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di distrik Covalima antara 5 September dan 30 Oktober 1999

Semua tertuduh kabarnya masih bebas di Indonesia.

14-2003

Kolonel Herman Sedyono

Bupati Distrik Covalima, serdadu TNI

Letnan Kolonel Achmad Mas Agus

Komandan Kodim 1635 (Covalima) antara Januari dan 4 September 1999 dan 7 September sampai 4 Oktober 1999

Letnan Kolonel Lilik Koeshardianto

Komandan Kodim 1635 (Covalima) antara 4 September dan 7 September 1999

Letnan Kolonel Gatot Subiaktoro

Kapolres Covalima

Kapten Achmad Syamsuddin

Kasdim Kodim 1635

Letnan Sugito

Komandan Koramil 1635-01 (Suai)

Letnan Widodo

Komandan Koramil 1635-02 (Tilomar)

Letnan Ari alias Komandan Ari

Komandan Koramil 1635-05 Batalion 143 (Fohorem)

Sersan Mayor Harun Tateny

Komandan Koramil 1635-05

Sersan Mayor Supoyo

Komandan Koramil 1635-0? (Salele)

Simão Nahak

Serdadu TNI

Raul Halek

Serdadu TNI

Americo Seran

Babinsa Lohorai, Matai TNI

Julio Borges

Wakil Komandan Lactos pos TNI

Leoneto Cardoso

Serdadu TNI, dan

Anito Lau

Serdadu TNI Lactos pos Fohorem

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. tindakan kekerasan dan penyiksaan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara Januari dan April 1999 di distrik Covalima termasuk di antaranya
2. penyiksaan satu orang pada atau kira-kira pada 14 April 1999 di Uma Merah (Tilomar, Covalima)
3. penyiksaan terhadap enam orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Belilik Leten (Fatumean, Covalima)
4. penyiksaan terhadap empat orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Nikir, Raihun (Tilomar, Covalima)
5. pembunuhan atas penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara Januari dan Agustus 1999 di Distrik Covalima termasuk di antaranya
6. pembunuhan terhadap empat orang pada atau kira-kira pada 23 April 1999 di Nikir (Tilomar, Covalima)
7. pembunuhan satu orang pada atau kira-kira pada 13 Mei 1999 di Nikir (Tilomar, Covalima)
8. pelenyapan yang disengaja terhadap empat orang pada April 1999 di Distrik Covalima
9. pembunuhan terhadap empat orang antara 4 dan 5 September 1999 di Distrik Covalima
10. pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Gereja Avê Maria (Suai, Covalima) pada atau kira-kira pada 6 September 1999
11. penculikan terhadap satu orang antara 6 dan 7 September 1999 di Suai (Covalima)
12. pembunuhan terhadap empat orang antara 6 dan 8 September 1999 di Covalima

13. pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya, dan percobaan pembunuhan terhadap satu orang, dan penculikan terhadap tujuh orang antara 4 dan 26 September 1999 di Covalima
14. pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Desa Lactos pada atau kira-kira pada 12 September 1999 di Covalima
15. pendeportasian penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara 5 September dan 30 Oktober 1999 di Covalima
16. hukuman mati terhadap penduduk yang tidak diketahui jumlahnya antara 5 September dan 30 Oktober 1999 di Covalima

Seluruh terdakwa kabarnya masih bebas di Indonesia.

34-2003

Francisco Pereira

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan terhadap satu orang, penahanan terhadap empat orang dan penyiksaan terhadap dua orang pada April dan Mei 1999 di Zumalai, Covalima. Dia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan tersebut.

1-2004

Xisto Barros

Anggota milisi Laksaur

Cesar Mendonca

Anggota milisi Laksaur, dan

Josep Nahak

Anggota milisi Laksaur

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan tiga orang dan percobaan pembunuhan terhadap tiga orang pada 4 dan 5 Oktober 1999 di hutan Lookeu
2. beberapa tindakan kekerasan yang terjadi antara April dan Oktober 1999 di Distrik Covalima termasuk pembunuhan, percobaan pembunuhan, penahanan, pemenjaraan, dan pendeportasian penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya

Josep Nahak

Diputuskan tidak layak disidangkan.

Kedua terdakwa lainnya dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan di atas.

4-2004

Vasco da Cruz

Komandan milisi Mahidi Zumalai

Domingos Alves

Kepala Desa Raimea, Wakil Komandan milisi Mahidi

Guilhermino de Araujo

Kepala Desa Mape, Ketua BRTT Zumalai

Napoleão dos Santos

Komandan Kompi milisi Mahidi di Bailaco, Raimea

Simao Tasion

Komandan Kompi milisi Mahidi di Beco 1

Lino Barreto

Pertahanan Sipil [HANSIP], milisi Mahidi, dan

Cancio Lopes de Carvalho

Komandan Umum milisi Mahidi Timor Timur

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pemenjaraan atau bentuk penahanan lain dan penyiksaan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Zumalai antara Januari dan Oktober 1999
2. pembunuhan satu orang pada 24 Januari 1999 di Mape (Zumalai, Covalima)
3. pembunuhan terhadap tiga orang pada 24 Januari 1999 di Lour (Zumalai, Covalima)
4. pembunuhan satu orang dan pelenyapan disengaja terhadap dua orang pada 13 April 1999 di Zumalai
5. pembunuhan terhadap tiga orang pada 27 Maret 1999 di Mape (Zumalai, Covalima)
6. pembunuhan terhadap satu orang pada 17 April 1999 di Zulo (Zumalai Covalima)
7. pembunuhan terhadap empat orang pada 4 Mei 1999 di Mape (Zumalai, Covalima)
8. pembunuhan satu orang pada 18 Juni 1999 di Mape (Zumalai, Covalima)
9. penculikan satu orang pada 5 September 1999 di Fatuleto (Zumalai, Covalima)
10. pembunuhan dua orang pada 5 September 1999 di Beco 1 (Suai, Covalima)
11. pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya pada atau kira-kira pada 6 September 1999 di Gereja Avê Maria, Suai (Covalima)
12. pembunuhan satu orang pada 12 September 1999 di Fatuleto (Zumalai, Covalima)
13. pembunuhan satu orang pada 12 September 1999 di Kamenasa (Suai, Covalima)
14. pembunuhan satu orang pada 13 September 1999 di Zulo (Zumalai, Covalima)
15. pembunuhan terhadap dua orang selama September 1999 di Kamenasa (Suai, Covalima)

16. penghancuran harta benda penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya selama September 1999 di Zumalai dan Suai (Covalima)

17. pendeportasian atau pemindahan secara paksa terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Zumalai dan Covalima dari 30 Agustus sampai 30 Oktober 1999

Seluruh tertuduh dikabarkan masih bebas di Indonesia.

7-2004

Tomas Lopes M Udin

Wakil Komandan Kompi milisi Mahidi, didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan satu orang dan percobaan pembunuhan terhadap satu orang lainnya pada 12 September 1999 di Kamenasa, Suai, Distrik Covalima. Dia dikabarkan masih bebas di Indonesia.

8-2004

Domingos Maubuti

Anggota milisi Mahidi Mape (Zumalai), dan

Adriano Nascimento

Anggota milisi Mahidi Mape (Zumalai)

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pemerkosaan dan pembunuhan satu orang dan pembunuhan dua orang lainnya pada 17 April 1999 di Mape (Zumalai, Covalima)
2. pembunuhan satu orang dan percobaan pembunuhan terhadap satu orang lainnya pada 18 Juni 1999 di Mape (Zumalai, Covalima)
3. pembunuhan satu orang pada 13 September 1999 di Zulo (Zumalai, Covalima)

Semua terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

9-2004

Alfredo Breok

Seorang anggota milisi Mahidi, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan dua orang, pada 24 Januari 1999 di Mape (Zumalai, Covalima) dan satu orang lainnya pada 12 September 1999 di Fatuleto (Zumalai, Covalima). Dia dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Dili

14-2001

Francisco Soares

Seorang serdadu TNI, telah didakwa atas perkosaan terhadap satu orang di Useleo, Dili pada atau kira-kira pada 12 September 1999. Dia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

16-2003

Beny Ludji

Komandan Kompi A, Milisi Aitarak dan

José Pereira

Anggota Milisi Aitarak

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan dua orang pada 1 September 1999 di Mascarinhas (Dili). Mereka berdua dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

17-2003

José Lopes da Cruz Mendonca

Seorang anggota Milisi Aitarak telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan terhadap satu orang pada 1 September 1999 di Mascarinhas, Dili. Dia dikabarkan masih bebas di Indonesia.

2-2002

Marculino Soares

Komandan milisi Besi Merah Putih (BMP) Guico, Maubara, Liquiçá

Eurico Guterres

Wakil Panglima Milisi, Pasukan Pejuang Integrasi (PPI)

Manuel Sousa

Komandan Milisi BMP, Liquiçá

João Sera

Wakil Komandan Milisi BMP, Liquiçá

Floriano da Silva

Komandan Milisi BMP Gugleur, Liquiçá

Tomé Diogo

Opsir TNI

José Mateus

Serdadu TNI

António Gomes

Serdadu TNI

António Bescau

Serdadu TNI

Teofilo da S. Ribeiro

Serdadu TNI

Jorge Viegas

Serdadu TNI

Mateus Metan

Anggota BMP

Domingos Bondia

Anggota BMP

Fernando Sousa

Anggota BMP dan

Armindo Carrion

Anggota BMP

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan terhadap 13 orang demikian juga atas perlakuan semena-mena dan tindakan yang tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sehubungan dengan serangan yang terjadi di Distrik Dili pada 17 April 1999. Dalam sidang yang terpisah, Marculino Soares telah didakwa oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Terdakwa yang lain dikabarkan masih bebas di Indonesia.

11-2003

Marcelino Soares

Babinsa untuk Hera (Hera, Dili). Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap satu orang, penyiksaan tiga orang, dan tindakan semena-mena melalui penahanan yang tidak sah tiga orang pada atau sekitar 20 April 1999. Dia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

12-2003

Domingos Amati

Anggota Milisi Aitarak, dan

Francisco Matos

Anggota Milisi Aitarak

Telah didakwa atas pembunuhan terhadap satu orang pada 5 September 1999 di Hera (Dili).

Keduanya dinyatakan bersalah oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

13-2003

Eurico Guterres

Komandan Milisi Aitarak

Mateus de Carvalho

Komandan Kompi D (Hera) Milisi Aitarak

Timbul Silaen

Kepala Polisi Daerah Timor Timur (Kapolda)

Adolfo Viera Leão

Serdadu TNI

Agus Suwarno

Kapten TNI

António Ximenes

Anggota Milisi Aitarak

B. Marcelino

Wakil Komandan Kompi C (Becora) Milisi Aitarak

Caitano da Silva

Komandan Militer Bidau Santana (Pos 12) Milisi Aitarak

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. Penghancuran harta benda milik penduduk sipil, tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap penduduk sipil, pembunuhan terhadap sembilan orang, dan penghilangan paksa terhadap 6 orang sebagai balasan atas serangan terhadap Dioses Dili pada 5 September 1999
2. Penghancuran harta benda milik penduduk sipil dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya sehubungan dengan serangan terhadap tempat tinggal Uskup Belo, Biara Canossian, dan markas Palang Merah pada 6 September 1999
3. Tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap satu orang sehubungan dengan serangan terhadap Acacio Riberio pada 6 September 1999
4. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk sipil yang tidak diketahui jumlah pastinya antara 5 dan 9 September 1999

Semua terdakwa diperkirakan berada di Indonesia.

24-2003

Mateus de Carvalho

Komandan Kompi D (Hera) Milisi Aitarak

António Adolfo

Komandan Milisi Aitarak Metinaro

Luis da Costa Oliveira (alias Luis Metan)

Wakil Komandan Milisi Aitarak Metinaro

Letnan Agus Yuli

Komandan TNI Rajawali Hera

Letnan Untung

Komandan Koramil Metinaro

António Pinto (alias António B. atau Mautersa)

Serdadu TNI

Mário Malekat

Serdadu TNI

Lino 'Watulari'

Anggota Milisi Aitarak

Manuel da Silva
Anggota Milisi Aitarak

Gaspar da Silva
Anggota Milisi Aitarak

Florindo Malimeta
Anggota Milisi Aitarak

Domingos Beremau
Anggota Milisi Aitarak

Pedro Sousa
Anggota Milisi Aitarak

Domingos Teebuti
Anggota Milisi Aitarak

Mateus Malimeta
Anggota Milisi Aitarak

José Soares
Serdadu TNI

Matias Soares
Anggota Milisi Aitarak, dan

Joaquim Godinho
Serdadu TNI

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. penahanan terhadap tiga orang, penyiksaan terhadap tiga orang, pembunuhan terhadap satu orang di Hera (Dili) pada 20 April 1999
2. penculikan terhadap satu orang pada 1 Mei 1999 di Hera
3. penculikan, pembunuhan, dan penyiksaan dua orang pada 8 Mei 1999 di Hera
4. penahanan dan penyiksaan terhadap dua orang pada 20 Mei 1999 di Hera
5. penyiksaan dan pembunuhan terhadap dua orang pada 31 Agustus 1999 di Akanunu, Hera (Dili)
6. tindakan semena-mena dan pemindahan penduduk secara paksa terhadap sejumlah penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Metinaro antara 5 dan 8 September 1999
7. pembunuhan terhadap satu orang pada 6 September 1999 di Hera
8. pembunuhan terhadap satu orang pada 7 September 1999 di Metinaro
9. tindakan tidak manusiawi terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya pada atau sekitar 12 September 1999 di Metinaro

Semua terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

25-2003

Julio Fernandes

Seorang serdadu TNI, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk penghancuran harta benda dan deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara 5 dan 8 September 1999, dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya pada 12 September 1999 di Metinaro. Ia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

27-2003

Rudolfo Alves Correia

Seorang sedadu TNI, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap satu orang pada 6 September 1999 di Hera, (Dili). Ia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

28-2003

Alarico Mesquita

Anggota milisi Aitarak

Florindo Morreira

Anggota milisi Aitarak

Domingos Amati

Anggota milisi Aitarak

Francisco Matos

Anggota milisi Aitarak

Lorenzo Tavares

Anggota milisi Aitarak

Mateus Guterres

Anggota milisi Aitarak, dan

Angelino da Costa

Anggota milisi Aitarak

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk tindakan semena-mena dan penyiksaan terhadap dua orang pada 8 Mei 1999 di Akanunu, Hera (Dili). Mereka semua dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

29-2003

Florindo Morreira

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan dan penyiksaan terhadap dua orang di Akanunu, Hera (Dili) pada 31 Agustus 1999. Dibebaskan dari seluruh tuntutan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

10-2004

Letnan Kolonel Hulman Gultom

Kepala Polres Distrik Dili

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas

1. pembunuhan terhadap satu orang pada 14 Februari 1999 di Kota Dili
2. pembunuhan terhadap 12 orang pada 17 April 1999 di kediaman Manuel Carrascalão di Kota Dili
3. pembunuhan terhadap satu orang di jembatan Kuluhan pada 27 Agustus 1999
4. deportasi atau pemindahan paksa sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara 5 dan 9 September 1999
5. tindakan semena-mena terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya. Tuntutan tindakan semena-mena terdiri atas pembunuhan, penyerangan secara fisik, ancaman serangan fisik, penahanan di luar hukum, penghancuran harta benda antara Februari dan September 1999, termasuk serangan terhadap Dioses Dili pada 5 September, serangan terhadap rumah Uskup Belo, Biara Canossian, dan markas Palang Merah pada 6 September, di Distrik Dili.

Dia dikabarkan masih bebas di Indonesia.

10-2002

Mayor Jacob Djoko Sarosa

Komandan TNI Batalion 745, dan

Camilo do Santos

Komandan Pleton batalion 745

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas:

1. pembunuhan terhadap 21 orang selama September 1999 di distrik-distrik Lautém, Baucau, dan Dili.
2. penahanan terhadap tiga orang pada atau sekitar 10 September 1999 di Fuiloro, Lospalos, Lautém
3. tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap satu orang dan penahanan terhadap satu orang pada atau sekitar 21 September 1999 di Becora (Dili)

Keduanya dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Ermera

2-2000

Julio Fernandez

Seorang anggota Falintil, telah didakwa atas pembunuhan terhadap satu orang di Gleno (Ermera) pada 26 September 1999. Ia telah didakwa oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

3-2000

Carlos Soares Carmona

Telah didakwa atas pembunuhan terhadap satu orang di Asulau (Hatolia, Ermera) pada 28 Mei 1999. Ia kemudian dinyatakan bersalah oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

7-2000

Agustinho da Costa

Seorang anggota Tim Pancasila, telah didakwa atas pembunuhan terhadap satu orang di Atara (Atsabe, Ermera) pada 28 Mei 1999. Ia telah didakwa oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

12-2000

Carlos Soares

Seorang anggota Milisi Darah Integrasi telah didakwa atas pembunuhan terhadap satu orang, yang terjadi di Auleun (Letefoho, Ermera) pada 10 September 1999. Ia kemudian dinyatakan bersalah oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas pembunuhan.

9-2002

Carlos Soares

Anggota Falintil, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap satu orang di Aitura, Estado, Ermera pada 19 September 1999. Ia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

2-2004

Domingos de Deus

Serdadu TNI Koramil Atsabe, Kepala Desa Malabe, Anggota Tim Pancasila

Mohamad Roni

Komandan Koramil Atsabe, dan

João da Costa

Sersan Dua Koramil Atsabe, Babinsa Desa Atara, Komandan Tim Pancasila

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan dua orang dan percobaan pembunuhan satu orang dalam serangan atas tempat pemungutan suara Baboe Leten (Atsabe, Ermera) pada 30 Agustus 1999. Domingos de Deus dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Terdakwa lainnya dikabarkan masih bebas di Indonesia.

12-2004

Letnan Kolonel Muhammad Nur

Komandan Kodim 1637 Ermera

Sersan satu Melky

Anggota Kodim, Komandan Operasi

Sersan Dua Hilário

Serdadu TNI

Lukas Martins

Komandan milisi Darah Merah sub-distrik Hatulia

Jeca Pereira

Komandan milisi Darah Merah sub-distrik Ermera

Cipriano da Costa

Komandan Pleton milisi Darah Merah sub-distrik Hatulia

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan terhadap satu orang pada atau sekitar 4 April 1999 di Ermera (Ermera)
2. pembunuhan terhadap satu orang pada atau sekitar 17 Mei 1999 di Hatolia (Ermera)
3. pembunuhan terhadap satu orang pada atau sekitar 19 Mei 1999 di Hatulia (Ermera)
4. pembunuhan terhadap satu orang pada atau sekitar 8 Juni 1999 di Hatulia (Ermera)
5. pembunuhan dua orang pada atau sekitar 31 Agustus 1999 di Hatulia (Ermera)
6. pembunuhan dua orang pada atau sekitar 6 September 1999 di Hatulia (Ermera)
7. pembunuhan terhadap satu orang pada atau sekitar 13 September 1999 di Letefoho (Ermera)
8. pembunuhan terhadap satu orang pada atau sekitar 14 September 1999 di Letefoho (Ermera)
9. pembunuhan dua orang pada atau sekitar 13 September 1999 di Ermera (Ermera)
10. pembunuhan dan penyiksaan terhadap satu orang pada atau sekitar 5 September 1999 di Hatulia (Ermera)
11. pembunuhan dan penyiksaan terhadap satu orang pada atau sekitar 13 Mei 1999 di Hatulia (Ermera)

Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Lautém**9-2000****Jony Marques**

Anggota Kopassus, Komandan Milisi Tim Alfa 1994-1996

Manuel da Costa

Komandan Milisi Tim Alfa

João da Costa

Anggota milisi Tim Alfa

Paulo da Costa

Dihubungkan dengan milisi Tim Alfa

Amelio da Costa

PAM Swakarsa

Hilario da Silva

Dihubungkan dengan milisi Tim Alfa

Gonsalo do Santos

Dihubungkan dengan milisi Tim Alfa

Alarico Fernandes

Dihubungkan dengan milisi Tim Alfa

Mauterca Monis

Anggota milisi Tim Alfa

Gilberto Fernandes

Anggota milisi Tim Alfa

Syaful Anwar

Wakil Komandan Infanteri Pertama, Kopassus

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan karena pembunuhan 13 orang, penyiksaan terhadap satu orang, penempatan dan pemindahan paksa penduduk, dan tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Desa Leuro dan desa-desa lain di Lospalos antara April dan September 1999.

Seluruh tertuduh dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat kecuali Syaful Anwar yang kabarnya masih bebas di Indonesia.

3-2001

José Valenti

Seorang anggota milisi Tim Alfa, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap satu orang di Lautém pada atau sekitar 25 September 1999. Ia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

10-2002

Mayor Jacob Djoko Sarosa

Komandan TNI Batalion 745, dan

Camilo do Santos

Komandan Peleton Batalion 745

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan terhadap 21 orang selama September 1999 di Distrik Lautém, Baucau, dan Dili.

2. penahanan terhadap tiga orang pada atau sekitar 10 September 1999 di Fuiloro, Lospalos, Lautém
3. tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap satu orang dan penahanan terhadap satu orang pada atau sekitar 21 September 1999 di Becora (Dili)

Keduanya dikabarkan masih bebas di Indonesia.

12-2002

Inacio de Oliveira

Komandan Seksi Tim Alfa

Gilberto Fernandes

Seorang anggota Tim Alfa

José da Costa

Anggota Tim Alfa dan BRTT

Edmundo da Conceição

Bupati Distrik Lautém, Ketua BRTT, dan anggota kehormatan Kopassus

Rahman Zulkarnaen

Letnan Satu Infanteri, Komandan Kopassus di Lospalos, Lautém

Syaful Anwar

Sersan satu Infanteri, Kopassus di Lospalos

Thomas da Costa

Anggota BRTT dan Komandan Kompi Tim Alfa

Anton Regu

Anggota Tim Alfa

Joaquim Januario

Anggota Tim Alfa

Lamberto do Santos

Anggota Tim Alfa dan BRTT

Martinho da Costa

Anggota Tim Alfa dan BRTT dan

José Solari

Anggota BRTT

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan terhadap satu orang dan tindakan semena-mena terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya pada 27 Agustus 1999 di Lospalos. Dalam sidang terpisah, Inacio de Olivera, Gilberto Fernandes, dan José da Costa telah dituntut oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, atas kekerasan terhadap harta benda atau manusia oleh sekelompok orang yang bergabung untuk tujuan yang sama. Terdakwa lainnya dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Liquiçá

11-2001

Anastasio Martins

Anggota milisi Besi Merah Putih, dan

Domingos Goncalves

Anggota milisi Besi Merah Putih

Didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu pembunuhan tujuh orang di Liquiçá dan pendeportasian atau pemindahan paksa penduduk sipil di Metagou, Bukmera, dan Legimea selama September 1999. Mereka berdua dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

16-2001

Armando dos Santos

Komandan Peleton milisi Besi Merah Putih telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas:

1. pembunuhan atas sekelompok orang yang tidak diketahui jumlah keseluruhannya dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap satu orang selama Maret 1999 di Gugleur (Maubara, Liquiçá)
2. pembunuhan atas sekelompok orang yang tidak diketahui jumlah keseluruhannya di Kota Liquiçá (Liquiçá) pada 6 April 1999
3. pembunuhan atas sekelompok orang yang tidak diketahui jumlah keseluruhannya di Distrik Dili pada 17 April 1999.

Dia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

19-2001

Abilio Mendes Correia

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas:

1. pembunuhan dua orang pada atau sekitar 27 April 1999 di Tutuge (Loidahar, Liquiçá)
2. tindakan tidak manusiawi dan penyiksaan terhadap satu orang pada atau sekitar 9 Agustus 1999 di Tutuge (Loidahar, Liquiçá)

Dia kemudian dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

21-2001

Leoneto Martins

Bupati Distrik Liquiçá

Agustinho Alves Correia

Camat Liquiçá

Jose Afaat

Camat Maubara

Asep Kuswandi

Komandan Kodim Liquiçá

Purwanto

Wakil Komandan TNI, Liquiçá

Carlos Amaral

Komandan Koramil Maubara

Domianus Y. Sade

Komandan Koramil Bazartete

Adios Salosa

Komandan Polri Liquiçá

Tomé Diogo

Anggota TNI, Opsir Intelijen

Domingos Mendes

Serdadu TNI, Maubara

Henrique Morreira

Opsir TNI, Bazartete

Jorge Viegas

Opsir TNI, Maubara

Manuel Sousa

Komandan milisi Besi Merah Putih (BMP) Liquiçá

João Sera

Wakil Komandan Milisi BMP Liquiçá

Felipe Grasiano

(Tidak ada catatan afiliasi)

Zacarias Alves

Komandan milisi BMP Bazartete dan Liquiçá

Jacinto Goncalves

Komandan milisi BMP Bazartete

Floriano da Silva

Komandan milisi BMP Gugleur

Domingos Goncalves

Komandan milisi BMP Bazartete

Victor da Cruz

Anggota milisi BMP Bazartete

Victor Lopes

Komandan milisi BMP Bazartete

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk beberapa insiden yang terjadi di Distrik Liquiçá antara Januari dan September 1999. Mereka dituntut atas:

1. pembantaian dan pembunuhan atas lebih daripada 50 warga sipil, tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap ratusan warga sipil, sebagai balasan atas serangan terhadap gereja Liquiçá di Liquiçá Dato (Liquiçá, Liquiçá) pada 6 April 1999
2. tindakan semena-mena terhadap penduduk sipil yang dilakukan antara Januari 1999 dan September 1999 di Distrik Liquiçá
3. pembunuhan terhadap satu orang pada 7 April 1999 di Maubara
4. pembunuhan dua orang, penghilangan paksa atas satu orang pada 5 April 1999 di Liquiçá (Liquiçá)
5. pembunuhan terhadap satu orang pada 9 April 1999 di Maumeta (Bazartete)
6. pembunuhan terhadap tiga individu pada 15 April 1999 di Maumeta (Bazartete)
7. pembunuhan atas dua orang pada 27 April 1999 di Tutuge (Liodahar)
8. tindakan tidak manusiawi terhadap satu orang, penghilangan paksa atas satu orang pada atau sekitar 9 Agustus 1999 di Tutuge (Loidahar)
9. pembunuhan terhadap tiga orang pada 4 September 1999 di Metagou (Bazartete)
10. pembunuhan terhadap satu orang pada 7 September 1999 di Bukmera (Bazartete)
11. deportasi atas ratusan warga sipil dari Liquiçá antara 5 September dan 19 September 1999.

Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

23-2003**Rusdin Maubere**

Seorang penasihat milisi Besi Merah Putih, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas penghilangan paksa dan penyiksaan terhadap satu orang pada 26 April 1999 di Bazartete, Liquiçá. Ia kemudian dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

Manatuto**11-2002****Vidal Doutel Sarmento**

Bupati Manatuto

Filomeno Brito

Komandan Seksi milisi Mahadomi

António D. Sarmiento

Komandan Seksi milisi Mahadomi

Thomas dos Reis

Komandan Seksi milisi Mahadomi dan

Aleixo de Carvalho

Komandan milisi Mahadomi

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan terhadap satu orang dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap satu orang pada atau sekitar 16 Mei 1999 di Laleia (Manatuto)
2. penahanan dan penyiksaan atas tiga orang antara 11 dan 14 Mei 1999 di Manatuto (Manatuto)
3. tindakan semena-mena terhadap penduduk sipil Manatuto antara Mei dan Oktober 1999
4. pemindahan penduduk secara paksa asal Manatuto pada September 1999
5. pembunuhan terhadap lima orang dan tindakan tidak manusiawi terhadap dua orang antara 7 dan 14 September 1999 di Distrik Manatuto.

Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Manufahi

8-2000

Mateus Tilman

Seorang anggota milisi Ablai, telah didakwa atas usaha pembunuhan terhadap enam orang, perlakuan semena-mena berat, dan penghancuran harta benda sebagai balasan atas sebuah serangan terhadap penduduk sipil Holarua (Same, Manufahi) pada 2 September 1999. Dia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

3-2002

Bernardino da Costa

Komandan milisi Tim Sasurut-Ablai (Same) telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap tujuh orang dan deportasi atau perpindahan penduduk sipil secara paksa, penahanan, atau pelanggaran kebebasan secara fisik dan tindakan semena-mena terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di Distrik Same selama April, Agustus, dan September 1999. Dia dikabarkan masih bebas di Indonesia.

18-2001

Benjamin Sarmiento

Wakil Komandan milisi Tim Sasurut, Ablai

Romerio Tilman

Komandan ke tiga dari milisi Tim Sasurut, Ablai

João Sarmiento

Anggota milisi Ablai

Domingos Mendonca

Anggota milisi Ablai

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan terhadap tujuh orang dan penahanan atau pelanggaran kebebasan secara fisik lainnya, pendeportasian atau pemindahan penduduk sipil secara paksa, dan tindakan semena-mena terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya di distrik Manufahi selama April, Agustus, dan September 1999.

Mereka semua dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

13-2004**Nazario V. dos S. Cortereal**

Komandan Umum milisi Ablai Manufahi

Francisco Capela Ferrão

Wakil Komandan milisi Ablai Manufahi, dan Komandan Same

Kapten Sugyono

Komandan Kopassus Manufahi

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk tindakan semena-mena atas kejahatan yang dilakukan di Distrik Manufahi selama 1999 termasuk:

1. pembunuhan dua orang pada 17 April 1999 di Orluli
2. pembunuhan terhadap satu orang pada 17 April 1999 di Grotu Lau
3. pembunuhan terhadap satu orang pada 17 April 1999 di Fahikeo
4. pembunuhan terhadap satu orang pada 24 April 1999 di Same
5. pembunuhan terhadap satu orang pada 28 April 1999 di Beikala
6. pembunuhan dua orang pada 30 Agustus 1999 di Datina
7. pembunuhan terhadap satu orang pada 3 September 1999 di Holarua
8. pembunuhan terhadap satu orang pada 9 September 1999 di Datina
9. pembunuhan terhadap satu orang pada 9 September 1999 di Fahi-Luhan
10. pembunuhan terhadap satu orang pada 12 September 1999 di Ailuli (Letefoho)
11. pembunuhan terhadap satu orang pada 16 September 1999 di Ladiqui (Letefoho)
12. pembunuhan terhadap empat orang pada 24 September 1999 dekat Betano
13. pembunuhan terhadap satu orang di September 1999 di Selihasan (Betano)
14. pembunuhan terhadap satu orang pada 20 Oktober 1999 di Beikala
15. usaha pembunuhan atas satu orang pada 5 Agustus 1999 di Same

16. melukai tiga orang pada 2 September 1999
17. penahanan di luar hukum atas sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya dari 30 Agustus sampai 9 September 1999
18. pemindahan paksa penduduk distrik Manufahi dari 5 September sampai dengan 25 Oktober 1999
19. penghancuran harta benda milik sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara Agustus dan 25 Oktober 1999

Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

14-2004

Letnan Sumino

Komandan Koramil Same

Guilhermino Marcal

Komandan Kompi Ablai milisi Holarua (Same) dan

José Laranzeira

Komandan Kompi milisi Ablai Daisua (Same)

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan dua orang pada 17 April 1999 di Same (Manufahi)
2. pembunuhan terhadap satu orang pada 24 April 1999 di Distrik Manufahi
3. pembunuhan terhadap empat orang pada 24 September 1999 di Distrik Manufahi
4. tindakan yang tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap empat orang pada atau sekitar 2 September 1999 di Manufahi
5. pemindahan paksa sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara 5 September dan 30 Oktober 1999 di distrik Manufahi
6. tindakan semena-mena terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara Januari dan Oktober 1999

Para terdakwa diperkirakan masih berada di Indonesia.

Oecussi

20-2001

Florencio Takaqui alias Taquai

Anggota, milisi Sakunar

Simão Lopes

Komandan Tertinggi, milisi Sakunar

Domingos Obe

Anggota, milisi Sakunar

Tomas Bubun

Anggota, milisi Sakunar

Laurentino Soares

Komandan, milisi Sakunar

Julio da Costa

Anggota, milisi Sakunar

Gabriel Kolo

Komandan, milisi Sakunar

António Sabraca

Komandan, milisi Sakunar dan anggota TNI Passabe

Elvis Lopes

Anggota, milisi Sakunar

Bonafacio Bobo

Anggota, milisi Sakunar dan

Andre Ulan

Sersan, anggota TNI

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai balasan atas lima insiden yang terjadi di Passabe (Oecussi) pada 1999. Mereka dituntut atas:

1. pembantaian 47 orang pada 10 September 1999
2. pembunuhan terhadap 18 orang pada 8 September 1999 di Nibin, Desa Usi Taqueno Tumin dan Quibiselo, Desa Bobo Manat
3. penahanan atau pembatasan berat atas kebebasan fisik terhadap 43 orang di Polres Passabe pada 18 April 1999
4. tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap satu orang yang terjadi pada 9 Agustus 1999
5. tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap satu orang pada 8 September 1999
6. tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap delapan orang pada 10 September 1999
7. deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya pada 9 September 1999.
8. tindakan semena-mena terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara April dan September di distrik Oecussi

Florencio Takaqui alias Taquai

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam sidang yang terpisah, oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.

Terdakwa lainnya dikabarkan masih bebas di Indonesia.

4-2002

X (Nama disembunyikan oleh Keputusan Pengadilan)
Telah didakwa pembunuhan terhadap tiga orang di Nitibe, Tumin dan Quiobeselo pada 10 September 1999. X telah dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

5-2002

Umbertus Ena

Anggota Milisi Sakunar, dan

Carlos Ena

Anggota Milisi Sakunar

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan dua orang dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang ditujukan untuk menimbulkan penderitaan secara berat terhadap satu orang di Naetuna (Passabe) di atau sekitar 9 September 1999. Panel Khusus Kejahatan Berat menghukum Umbertus Ena atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan membebaskan Carlos Ena atas kedua tuntutan tersebut.

13-2002

Laurentino Soares

Komandan Milisi Sakunar, dan

Bonafacio Bobo

Komandan Milisi Sakunar

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan atas delapan orang di Makelab, Taiboco I (Pante Makassar, Oecussi) pada atau sekitar 20 Oktober 1999. Kedua terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

3-2003

Agustinho Atolan

Komandan Milisi Sakunar Naetuna, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap satu orang yang terjadi pada 8 September 1999 di Nitas (Nibin, Oesilo, Oecussi). Dia kemudian dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Panel Khusus Kejahatan Berat.

4-2003

Anton Lelan Sufa

Pemimpin milisi Sakunar Bebo; dan

Agustinho Cloe

Anggota milisi Sakunar Bebo

Agustinho Cab

Anggota milisi Sakunar Bebo

Lazarus Tuli

Anggota milisi Sakunar Bebo

Lino Beno

Anggota milisi Sakunar Bebo

António L. Simão

Anggota milisi Sakunar Bebo, dan

Domingos Metan

Anggota milisi Sakunar

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan dua orang dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap satu orang pada atau sekitar 16 September 1999 di Netensuan (Nitibe, Oecussi). Semua terdakwa telah dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

10-2003**Mateus Lao**

Seorang anggota Milisi Sakunar, telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembunuhan terhadap satu orang di Naetuna (Passabe, Oecussi) pada 1 September 1999. Ia kemudian dihukum oleh Panel Khusus Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

19-2003**Liberatus Manu**

Anggota Milisi Sakunar, dan

Aleixo Sepa

Anggota Milisi Sakunar

Telah didakwa atas pembunuhan terhadap empat orang dan usaha pembunuhan atas satu orang lainnya pada 8 dan 9 September 1999 di Passabe (Oecussi). Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

22-2003**Januario da Costa**

Komandan Milisi Sakunar Passabe, dan

Mateus Punef

Anggota Milisi Sakunar

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. pembunuhan terhadap 18 orang dan tindakan tidak manusiawi terhadap tiga orang pada 8 September 1999 di Nibin, Tumin, dan Quibiselo (Nitibe, Oecussi)
2. deportasi atau pemindahan paksa penduduk terhadap seorang penduduk sipil di Tumin pada 9 September 1999

3. pembantaian 47 orang, tindakan yang tidak manusiawi lainnya terhadap 7 orang, pada 10 September 1999 di Tumin, Nibin, dan Quibiselo, dan tindakan semena-mena terhadap seorang penduduk sipil
4. tindakan semena-mena terhadap satu orang penduduk sipil antara 8 dan 10 September 1999 di Nitibe Oecussi

Januario da Costa dan **Mateus Punef** dihukum oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

30-2003

Laurentino Soares

Wakil Komandan Milisi Sakunar

Herman Naubasa

Anggota Milisi Sakunar

Nyongky Wankai

Anggota Milisi Sakunar

Eddie Talan

Anggota Milisi Sakunar

Luis Infien

Anggota Milisi Sakunar

Firminio Auni

Anggota Milisi Sakunar

Felipe Poto

Anggota Milisi Sakunar

Ala Uni

Anggota Milisi Sakunar, dan

Domingos Cav

Seorang anggota Milisi Sakunar,

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk beberapa pelanggaran yang terjadi di Pante Macassar (Oecussi) yakni:

1. pembunuhan terhadap satu orang di Bihala pada 22 September 1999
2. pembunuhan terhadap satu orang dan usaha pembunuhan atas satu orang pada 23 September 1999 di Cutete
3. pembunuhan terhadap tiga orang, penculikan atas empat orang, dan tindakan tidak manusiawi terhadap satu orang di Sikone
4. pembunuhan terhadap satu orang pada 13 Oktober 1999 di Kolam Cina
5. pembunuhan terhadap tiga orang pada 14 Oktober 1999 di Desa Tono/Lifau

Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

31-2003

Samuel Vaz

Anggota milisi Sakunar

Luis Infien

Anggota milisi Sakunar

Saran Bariak

Anggota milisi Sakunar dan

Lalu Manus

Anggota milisi Sakunar,

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan terhadap tiga orang pada 13 September 1999 di Padiæ, Pante Makassar, Oecussi. Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

32-2003

Jorge Ulan

Serdadu TNI

João Gomes

Serdadu TNI, dan

Blasius Manek

Serdadu TNI

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan dua orang dan upaya pembunuhan terhadap dua orang pada 11 September 1999 di Nunbei (Pante Makassar, Oecussi). Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Viqueque

3-2004

Letnan Kolonel Djoko Soeharsoyo

Komandan Kodim 1630 (sampai 15 Agustus 1999)

Letnan Kolonel Gustaf Heru

Komandan Kodim 1630 (sejak 15 Agustus 1999)

Letnan Satu Minton

Komandan Kopassus, Kodim 1630

Letnan Satu Yusuf Tandi

Kepala seksi Intelegen Kodim 1630

Sersan Kepala Andreas Prawin

Serdadu TNI Seksi Intelegen, Babinsa Carau Balu (Viqueque, Viqueque)

Martinho Fernandes

Bupati Distrik Viqueque, Komandan milisi Makikit, Ketua FPKD Viqueque dan Anggota Kehormatan Kopassus

Emiliano Joaquim Gomes

Asisten dua Distrik Viqueque, Wakil Komandan milisi Makikit, Wakil Ketua FPKD Viqueque dan Anggota Kehormatan Kopassus

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk:

1. penyiksaan dan pembunuhan atas satu orang pada 3 Mei 1999 di kota Viqueque tua
2. pembunuhan terhadap satu orang pada atau sekitar 4 Mei 1999 di kota Viqueque tua
3. pembunuhan terhadap satu orang pada 10 Mei 1999 di Buicaren
4. pembunuhan terhadap satu orang pada 27 June 1999 di Anawain (Viqueque)
5. pembunuhan terhadap tiga orang pada 11 Agustus 1999 di Beloi
6. pembunuhan terhadap satu orang pada 18 September 1999 di Beaco
7. deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa pada atau sekitar 10 September 1999 di Distrik Viqueque
8. tindakan semena-mena terhadap sekelompok penduduk sipil yang tidak diketahui jumlahnya antara 1 Januari dan 25 September 1999 di Viqueque

Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Timor Barat

11-2000

Leonardos Kasa

Telah didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas satu kali pemerkosaan yang terjadi di Betun (Timor Barat) pada 10 September 1999. Panel khusus untuk Kejahatan Berat menyatakan bahwa ia tidak memiliki yurisdiksi atas kasus ini dan kasusnya dibatalkan.

Dakwaan Nasional

5-2003

Wiranto

Jenderal TNI, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Komandan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Zacky Anwar Makarim

Mayor Jenderal; Kepala Tim Khusus/Ajudan Jenderal Satuan Tugas; Anggota Satuan Tugas Pengawasan Konsultasi Umum di Timor-Timur

Kiki Syahnakri

Mayor Jenderal; asisten Operasi untuk Kepala Staff Angkatan Darat; Panglima Komando Darurat Militer di Timor-Timur

Adam R Damiri

Mayor Jenderal; Komandan Militer Komando Militer Regional IX (Bali, Nusa Tenggara Timur dan Barat, dan Timor-Timur)

Suhartono Suratman

Kolonel; Komandan Korem 164 (Timor-Timur) sampai dengan 13 Agustus 1999

Mohamad Noer Muiz

Komandan Korem 164 (Timor-Timur) sejak 13 Agustus, 1999

Yayat Sudrajat

Letnan Kolonel; Komandan Satuan Tugas Tribuana VIII Komando Militer Sub-Regional 164 (Timor-Timur) dan

Abilio José Osório Soares

Gubernur Timor-Timur

Telah didakwa sebagai perorangan dan atasan dalam pembunuhan, deportasi, atau pemindahan penduduk sipil secara paksa dan tindakan semena-mena terhadap ratusan ribu warga Timor-Leste selama 1999. Para terdakwa dikabarkan masih bebas di Indonesia.

Lampiran 4:

Ucapan terimakasih

Pendahuluan

Kami ingin menyatakan penghargaan sedalam-dalamnya pada semua orang yang berkontribusi pada Laporan ini, dalam berbagai peran. Tanpa pengetahuan, keahlian, dedikasi, kemurahan-hati, dan pengorbanan banyak organisasi, teman, dan kolega—dari Timor-Leste, Indonesia, dan penjuru dunia lainnya—karya besar ini tidak mungkin diselesaikan.

Mereka yang paling berjasa adalah semua yang memberi “bahan mentah” untuk pekerjaan ini: saudara-saudari kami yang telah membagi pengalaman dan informasi kepada Komisi lewat pernyataan, wawancara, dan kesaksian publik; mereka yang memberikan buku, dokumen, dan masukan; staf kami yang mengumpulkan dan merekam data; mereka yang mengorganisasi dan mengarsipkan bahan-bahan ini melalui berbagai tahapan sehingga menjadi Laporan ini; mereka yang bekerja sebagai penganalisa, peneliti, penerjemah, penyunting, dan mereka yang membuat desain, tata-letak, dan pencetakan Laporan ini. Dan terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih yang hangat kepada mereka yang memungkinkan produksi Laporan ini: staf administrasi dan pendukung kami, dan pemerintah serta lembaga multilateral dan organisasi pemerintah yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga kepada Komisi dalam bentuk dana maupun jasa atau benda.

Nama-nama mereka telah disebutkan dalam halaman-halaman berikut ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang telah bersama kami mempunyai visi untuk Timor-Leste yang telah berekonsiliasi, dan berkomitmen pada hak asasi manusia. Kami berterima kasih atas sumbangan mereka untuk mewujudkan visi ini lewat karya ini.

Komisaris Nasional

Donor

Pekerjaan Komisi telah menjadi nyata lewat bantuan dari pemerintah dan lembaga multilateral serta organisasi non-pemerintah yang nama-namanya disebutkan di bawah ini:

| Donor | Kontribusi (dalam USD) |
|---|--|
| Australia - AusAID | 363.341,42 plus 7 penasihat melalui ABV, AVI, AYAD, CBF, dan peralatan |
| Benetec (Human Rights Data Analysis Group) | Analisis statistik |
| Catholic Relief Services (Kupang) | 12.814,70 |
| CEP (TFET administrator lewat World Bank) | 166.400,00 |
| Denmark (via UNDP) | 82.526,00 plus 2 penasihat |
| EC (via UNDP, melibatkan BCPT) | 224.350,00 plus 4 penasihat |
| EC (via UNHCR) | 350.512,22 |
| Finlandia | 19.995,00 |
| Hivos | 34.249,33 |
| ICTJ | Bantuan teknis dan konferensi luarnegeri |
| Inggris Raya | 931.347,19 plus 2 Penasihat |
| Irlandia | 493.156,85 |
| Jepang | 999.361,64 |
| Jerman - GTZ | 240.946,28 plus 1 penasihat dan 1 peneliti |
| Kanada - CIDA | 190.075,55 |
| Mennonite Central Committee, US | 1 penasihat |
| Norwegia | 252.838,10 |
| OHCHR - (via Unit Hak Asasi Manusia PBB, Timor-Leste) | Penerjemahan, bantuan teknis, plus lima penasihat |
| PIKUL, Timor Barat | 4.117,60 |
| Portugal | Penerjemahan ke dalam bahasa Portugis |
| Selandia Baru | 764.382,20 |
| Swedia (via UNDP) | 541.078,00 |
| UNDP | Manajemen sebagian kontribusi donor dan peralatan |
| UNHCR | Advokasi donor, manajemen, dan peralatan |
| UNTAET / UNMISSET/ UNOTIL | 2 penasihat dan peralatan |

| | |
|------------------------|--|
| UN Volunteers | |
| USA - USAID | Hibah barang senilai 395.168,50, plus tiga penasihat |
| US Institute for Peace | 80.000,00 |

Masukan

- Akihisa Matsuno: buku
- Aktivist perempuan Timor-Leste
- Amnesty International: laporan
- Associação dos Prisioneiros Politicos (ASSEPOL): dokumen riset
- Australian Council for International Development (ACFID): dokumen dan buku
- Catholic Relief Services (CRS): 1978-1979 kelaparan
- Clive Scollay: *footage* video
- Fokupers
- Geoffrey Gunn, riset
- Geoffrey Robinson: riset mengenai penentuan nasib sendiri
- Helene van Klinken, riset
- Hugh Dowson: dokumen UK yang telah dibuka
- Human Rights Watch: laporan
- International Centre for Transitional Justice (ICTJ): buku
- John Waddingham: bahan riset
- Jill Jolliffe: riset mengenai tahanan politik
- Jose Ramos-Horta: dokumen Santa Cruz
- Keluarga Dr. Herb Feith: perpustakaan
- Koalisi LSM Timor Barat (CIS, Truk-F, Lakmas, Yabiku, YPI, PIKUL, CRS)
- Komnas Perempuan dan Tim Kemanusiaan Timor Barat
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM): bahan riset
- Mayor Jenderal Mario Lemos Pires: buku
- Manuel Carceres: foto
- National Security Archives: dokumen AS yang sudah dibuka
- Nelson Goncalves: foto
- Office of High Commissioner for Human Rights: Laporan Geoffrey Robinson mengenai kejadian 1999

- Pat Walsh: buku
- Pemerintah Australia: dokumen rahasia yang sudah dibuka dan buku
- Pemerintah Jepang: dokumen
- Pemerintah Selandia Baru: dokumen yang sudah dibuka
- Penny Tweedie: foto
- Suzannah Linton: riset hukum
- Unit Kejahatan Berat PBB: UNPOL riset tentang Craras, Balibó, dan Santa Cruz
- UNICEF: bahan mengenai anak-anak
- UNMISSET Unit Hak Asasi Manusia: buku
- Yayasan HAK

Peserta Audiensi Publik Nasional

Perempuan dalam Konflik

Beatriz Miranda Guterres, Bibileo, Viqueque
 Domingas Ulan, Oecussi
 Feliciano Cardoso, Covalima
 Fernanda dos Reis Araujo, Vila Verde, Dili
 Fernanda Soares, Mascarinhas, Dili
 Ines da Conceicao Lemos, Ermera
 Joao Fernandes, Manufahi
 Komnas Perempuan, Indonesia
 Leonia Amaral Soares, Manatuto
 Maria Antonia Santos Sousa, Manatuto
 Maria Josefina Cardoso, Ainaro
 Mario Carrascalao, Dili
 Natalia dos Santos, Liquiçá
 Olga Corte-Real, Manufahi
 Olga da Silva Amaral, Mauxiga, Ainaro
 Rita da Silva, Maubisse, Ainaro
 Tim Kemanusiaan Timor Barat (TKTB), Indonesia
 Vitoria Henrique, Dili

Tahanan Politik

Ade Rostina Sitompul, Indonesia
Adelino Soares, Sakoko, Ermera
Antonio Aitahan Matak, Dili
Bernadino Villanova, Atauro, Dili
Ceu Federer, Dili
David da Conceicao da Costa Thon, Bemori, Dili
Gil Guterres, Dili
Gracilda Quimarães, Lautém
Gregorio Saldanha, Dili
Joao Baltazar Martins, Mandarin, Dili
Joao Vinhas, Lautém
Julio Alvaro, Lahane, Dili
Luhut Pangaribuan, Indonesia
Maria da Silva, Bidau, Dili
Maria Jose Franco Pereira, Santa Cruz, Dili
Mariano Soares, Viqueque
Martininho Martins, Dili

Pemindahan paksa dan kelaparan

Abilio dos Santos Belo, Mau Chiga, Ainaro
Antonio Pires, Mau Chiga, Ainaro
Francisco Soares Pinto, Lautém
Gilman dos Santos, Dili
Joana Pereira, Fatuhada, Dili
Joao Sereno, Covalima
Manuel Carceres da Costa, Dili
Maria Jose da Costa, Letefoho, Manufahi
Mario Nicolao dos Reis, Baucau
Merlindi da Conceicao, Liquiçá
Pat Walsh, Australia
Rosalina da Costa, Rotuto, Manufahi

Konflik Internal 1974-1976

Antonio Serpa Ximenis, Laleia, Manatuto
Clementino dos Reis Amaral, Dili

Domingos de Oliveira, Australia
Francisco (Lu'olo) Guterres, Dili
Francisco Xavier do Amaral, Lecidere, Dili
Frederico Almeida Santos, Audian, Dili
James Dunn, Australia
Joao Carrascalao, Dili
Jose Ramos-Horta, Dili
Jusuf Wanandi, Indonesia (mengirim makalah)
Kay Rala Xanana Gusmao, Dili
Manuel Agostinho Freitas, Lepo, Covalima
Manuel Duarte, Horahu, Ermera
Mari Alkatiri, Dili
Mario Viegas Carrascalao, Comoro, Dili
Mario Lemos Pires, Portugal
Monis da Maia, Manleuana, Dili
Paulo Freitas da Silva Bairo Formosa, Dili
Rogerio Tiago Lobato, Dili
Tomas Goncalves, Farol, Dili

Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional

Abel Guterres, Australia
Arnold Kohen, USA
Asvi Warman Adam, Indonesia
David Scott, Australia
Filomena de Almeida, Dili
Francesc Vendrell, Brussels
Gary Gray, USA
Ian Martin, New York
Kenneth Chan, Australia
Luisa Teotonio Pereira, Portugal
Monika Nakamura, Japan
Nugroho Katjasungkana, Indonesia
Suzannah Linton, Malaysia
Yeni Rosa Damayanti, Indonesia

Anak-anak dan Konflik

Aida Maria dos Anjos, Bairro Pite, Dili
Alexandrino da Costa, Dili
Alfredo Alves, Marconi, Dili
Belchior Francisco Alves Pereira, Kuluhun, Dili
Constantino X. Ornai, Balide, Dili
Dulce de Jesus Soares, Dili
Guilherme dos Reis Fernandes, Vila Verde, Dili
Isabel dos Santos Neves, Turiscaí, Manufahi
Joao da Silva, Becora, Dili
Julieta Jesuirina dos Santos, Liquiçá
Manuel Carceres da Costa, Dili
Marciana da Costa, Aituri Laran, Dili
Naldo Gil da Costa, Kuluhun, Dili
Petrus Kanisius, Bairro Pite, Dili

Pembantaian

Alexandre da Costa Araujo, Saboria, Aileu
Angelo Araujo Fernandes, Fuiloro, Lospalos
Antonio Amado J.R. Guterres, Laclo, Manatuto
Berta Caetano, Rasa, Lospalos
Domingos Maria Alves, Tulatakeu, Aileu
Felismina dos Santos Conceicao, Taibessi, Dili
Felismina Soares, Turiscaí, Manufahi
Florentino de Jesus Martins, Talimoro-Ermera
Geoffrey Robinson, USA
Helen Todd, Malaysia
Herminia Mendes, Liquiçá
Ilidio Maria de Jesus, Welaluho, Manufahi
Jose Gomes, Bibileo/Lalerek Mutin, Viqueque
Lucio Maneses Lopes, Santa Cruz, Dili
Mariana Marques, Muapitine, Lospalos
Mateus Soares, Orana, Manufahi
Max Stahl, UK
Olinda Pinto Martins, Bibileo / Lalerek Mutin, Viqueque
Simplicio Celestino de Jesus, Bairro Pite, Dili

Komunitas CAVR

Pendirian CAVR

Panitia Pengarah

Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, Yayasan Hak
Cristina Planas, UNHCR
Francisco Branco, asosiasi bekas tahanan politik
Francisco Guterres, CNRT
Galuh Wandita Soedjatmoko, UNTAET
Jacinto das Neves Raimundo Alves, asosiasi bekas tahanan politik
Manuel Abrantes, Komisi Keadilan dan Perdamaian, Dioses Dili
Maria Domingas Alves, Fokupers
Maria Olandina Isabel Caeiro Alves, Etwave
Patrick Burgess, UNTAET
Pe. Domingos Soares, CNRT
Ricardo Ribeiro, Presidium Juventude

Kantor Interim

Ai Kihara, penjangkauan komunitas
Ana Mesquita, pengembangan program
Cathy Molnar, administrasi
David McCann, pengembangan sistem
Dev Terway, logistik
Dircia M. C. G. de Andrade, administrasi
Emily Langston, hukum
Filipe dos Santos, logistik
Francisco Branco, staf penghubung
Gagat Handoyo, sumberdaya manusia
Galuh Wandita Soedjatmoko, pengembangan program
Henrik Boejen, keuangan
Inge Lempp, penerjemahan
Jacinto das Neves Raimundo Alves, staf penghubung
Jane Alexander, pengembangan program
Joann Kingsley, teknologi informasi
John Rouw, hubungan masyarakat

Jose Estevao Soares, staf penghubung
Katrina Skaetzens, hukum
Kendelle Clark, pengembangan program
Kieran Dwyer, pengembangan kelembagaan/pembangunan kapasitas/hubungan masyarakat
Matt Tilleard, kesekretariatan
Pat Walsh, koordinasi
Suzanne Butscher, keuangan
Suzanne Loughlin, pengembangan program
Ustinia Guterres, administrasi
Vicki Tchong, administrasi

Panel untuk menyeleksi komisaris nasional dan regional

Aleixo Ximenes, Dioses Dili dan Baucau
Brigida Correia, Trabalhista
Cecilio Caminha Freitas, Forum NGO
Dennis McNamara, DSRSG UNTAET
Francisco Branco, asosiasi bekas tahanan politik
Galuh Wandita Soedjatmoko, UNTAET Kantor Hak Asasi Manusia
Jacinto Alves Correia, asosiasi keluarga orang hilang
Jacob Martins dos Reis Fernandes, Fretilin
Joao Francisco dos Reis Amaral, KOTA
Maria Barreto, Rede Feto
Patrick Burgess, UNTAET Kantor Hak Asasi Manusia
Quiteria da Costa, UDT
Ricardo Ribeiro, Presidium Juventude

Pelaksanaan mandat CAVR di tingkat nasional

Komisaris Nasional

Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, Ketua
Fr. Jovito Rego de Jesus Araujo, Wakil Ketua
Isabel Amaral Guterres
Jose Estevao Soares
Jacinto das Neves Raimundo Alves
Maria Olandina Isabel Caeiro Alves
Pdt. Agostinho de Vasconcelos

Staff, penasihat, dan relawan di kantor nasional

Abel dos Santos, riset
Abilio Guterres, keamanan
Adelina da Cruz, sumberdaya manusia
Afonso Aleixo, penerjemahan
Afonso Lemos, keamanan
Aidalia de Fatima, dukungan program
Akihisa Matsuno, riset
Alexandra Van den Bergh, penulis
Alexandre M. Pires, pembaca pernyataan
Alexandrina Flores dos Santos, rekonsiliasi
Alvaro da Silva, pengambil pernyataan
Amanda Ramsay, perpustakaan
Americo de Araujo, reparasi
Amy Rothschild, hukum
Ana M. Mesquita Freitas, statistika
Ana Mesquita, pengembangan program
Ana Paula Maia, riset
Anna Bonomini, perpustakaan
Anna Russell, perpustakaan
Annie Keogh, editorial
Anthony Goldstone, co-manajer laporan final
Antonia Carmen da Cruz, radio/editorial
Antonio Goncalves, fotografer
Antonio Lima, kemanan
Apolinario da Silva Gusmao, keuangan
Aretha Kakerissa, penerjemahan
Arief W. Djati, editorial
Aristides Gusmão Sarmento, radio
Arsisto Ambyo, editorial
Arthur Morato, penyediaan/*procurement*
Aventino de Jesus Baptista Ximenes, koordinasi regional/produksi
Barbara Bee, perpustakaan
Benjamin Larke, rekonsiliasi
Bernardete Jong dos Santos, media/produksi
Bernardo Cardoso, koordinasi regional

Bernardo de Sá Nogueira, penerjemahan
Bonifacio Mateus da Costa, keamanan
Bryn Thorne-George, produksi
Cancio Ximenes Soares, radio
Candido de Deus, keamanan
Canisius C. Ximenes, teknologi informasi
Carla Farjado, reparasi
Carlito Carminha, fotografer
Carlos Perreira, keamanan
Celina da Costa Jeronimo, keuangan
Celina Martins, dukungan korban/produksi
Cesaltino B. Ximenes, pembaca pernyataan
Charmaine Chew, riset
Chris Roper, transkripsi
Christian Evert, teknologi informasi
Christine Hanson, pemeriksa fakta
Christine Schenk, produksi
Christine Vertucci, penghubung donor
Claire Taylor, keuangan
Constantino Pinto, administrasi
Cornelia de J. Soares, pemasukan data
Cornelio de Araujo, keamanan
Cristovao Perreira, rekonsiliasi/penulis
Daniel Gomes, administrasi
Darmawan Zaini, penerjemahan
David Alves Lopes, penulis
Deborah Katzman, dukungan korban
Delene Cuddihy, arsip
Deonisia M. Fernandes, rekonsiliasi
Derek Streulens, editorial
Dilva D. R. F. B. Costa, statistika
Diogo Neto Fraga, riset/penulis
Dircia M.C.G. de Andrade, administrasi/kampanye/arsip
Diva Maria Alves, pengembangan kelembagaan
Domingas da Silva, pemasukan data
Domingos Moniz, pemasukan data

Domingos S.F. Leite, rekonsiliasi
Domingos Savio Soares, sumberdaya manusia
Dominic Gray, penerjemahan
Douglas Kammen, riset
Duarte da Silva, pengembangan kelembagaan/kampanye
Dulce Junior, pengembangan kelembagaan
Dulce Trindade da Costa, arsip
Dwi Anggorowati Indrasari, penerjemahan
Eduardo Gonzalez, konsultan
Eleanor Taylor-Nicholson, editorial
Elisio P. Guterres Soares, pemasukan data
Elsa do Rosario Viegas da Costa, riset/pemeriksaan fakta
Emilio Barreto, rekonsiliasi/kampanye
Emily Chew, produksi
Emily Harwell, riset
Emily Langston, editorial
Emma Coupland, penghubung donor /pemeriksaan fakta
Eoghan Walsh, editorial
Ernestina dos Santos, statistika
Eufrasia da Crus, statistika
Eurico Celestino dos Reis Araujo, penerjemahan
Evalisa dos Reis Alves, pemasukan data
Fatima Gomes, pembersih
Felismina dos Santos da Conceicao, rekonsiliasi
Filipe H. dos Santos, logistik
Fiona Gleadow, arsip
Firman Maulana, penerjemahan
Florentina dos Santos, statistika
Florival A. dos Santos, keuangan
Francisca da Silva, hubungan masyarakat
Francisca Maia, produksi
Fred Rawski, riset
Fulgencio Aquino Vieira, riset/penulis/pemeriksa fakta
Galuh Wandita Soedjatmoko, manajemen program, wakil direktur, editorial
Geoffrey Gunn, riset
Geraldine Rodwell, arsip

Germano da Costa Boavida, penerjemahan
Gerry Van Klinken, riset
Gil Barros, pemasukan data/kesekretariatan
Gil Madeira, penerjemahan/produksi
Gunardi Handoko, penerjemahan
Harry Wibowo, editorial
Helene van Klinken, riset
Helio Freitas, riset/penulis/pemeriksa fakta
Hendrique M. de Jesus, logistik
Henriqueta D. C. Braz, statistika
Hermenegildo da Silva, pengambil pernyataan/pembaca pernyataan/penulis
Herminia H.F. de Oliveira, pengambil pernyataan/pembaca pernyataan/
pemeriksa fakta
Hersri Setiawan, editorial
Horacio Abilio, teknologi informasi
Horacio de Almeida, penulis
Howard Varney, penulis
Hugo Fernandes, pencarian kebenaran/co-manajer laporan final
Ian White, produser film
Ignatius Edi Yuwono, logistik
Inge Lempp, penerjemah
Isabel Fernandes de Lima, sumberdaya manusia
Istutiah Gunawan Mitchell, penerjemah
Jacob Domingos Freitas, logistik/supir
Jacqueline Baker, riset
Jaime Agostinho Hanjam, sumberdaya manusia
Jaimito Candido da Costa, rekonsiliasi/kampanye
Jana Asher, statistika
Jason Good, arsip
Joao Baptista, direktur eksekutif
Joao F. Mendes, radio
Joao Francisco dos Reis Amaral, administrasi
Joao M.P. da Costa, radio
Joao M.S. Barreto, administrasi publik
Joao Maia Pereira, logistik/supir
Joao Rui Sarmiento, pemasukan data

Joaquim Fonseca, konsultan
John Rouw, penasihat media
John Sheridan, pameran
John Waddingham, editorial
Jose Amaral, pemasukan data
Jose Caetano Guterres, dukungan program /arsip
Jose Custodio Marcal, hubungan masyarakat/arsip
Jose Goncalves de Araujo, riset
Jose Guilherme dos Reis, logistik
Jose Julio Soares, dukungan korban
Jose Meneses Serrao, dukungan korban
Jose Monis, logistik
Jose Virginia R.M. Cabral, riset
Josefa E. F.S. Guterres, pengambil pernyataan/pembaca pernyataan
Juliana da Silva, statistika
Juliana Do Rosario, pembersih
Juliao da Costa Cristovao Caetano, pengambil pernyataan/audiensi publik/produksi
Julie-Ann Ellis, editorial
Julien Poulson, desain grafis
Justin Fisher, statistika
Juvita dos Santos Guterres, koordinasi regional
Karen Campbell-Nelson, riset/editorial
Ken Ward, basis data
Kieran Dwyer, pengembangan kelembagaan/produksi/editorial
Kurnia Joedawinata, penerjemahan
Lakota Moira, desainer grafis
Lamartinho de Oliveira, hubungan media
Laura Henry, arsip
Laurindo Borges, keamanan
Leila Safira Assegaf, penerjemahan
Les Johnson, keuangan
Ligia Hermenegildo da Costa, keuangan
Ligia M. Lobato, statistika
Lisete Quintao, editorial
Liz Thompson, arsip
Luciana Ferrero, penerjemahan

Lucio B. N. Freitas, pembaca pernyataan
Lucio M.C.J. dos Santos, direktur eksekutif
Luisinha P. Martins, statistika
Lurdes Silveira, dukungan korban
Maeni Calado, penulis/pemeriksa fakta
Maggie McCafferty, arsip
Manuel da Cruz, pemasukan data
Manuel Fernandes Freitas, riset
Manuel Viegas, penerjemahan
Manuel X.M. Siqueira, logistik
Margaret Reid, arsip
Maria Aniceta F., pembaca pernyataan
Maria Linda X. Parada, pembaca pernyataan
Maria Rita Pires, produksi
Mariano N. de Carvalho, logistik/supir
Mario da Silva, logistik/supir
Mario Perreira de Jesus, keuangan
Mark Eastwood, keuangan
Martinho Mendes Perreira, hubungan masyarakat
Mateus Amaral, logistik/supir
Matheos Viktor Messakh, editorial
Matthew Easton, penulis
Maxine McKinney, dukungan korban
Megan Hirst, hukum
Melanie Lotfali, dukungan korban/editorial
Michelle Dukich, statistika
Miki Salman, penerjemahan
Monica Cardoso, pengembangan kelembagaan
Nadira Khalid, penerjemahan
Natercia D. J. Barreto, statistika
Nelson Freitas, teknologi informasi
Noemia Gomes Ferreira, riset
Noemio Alves, riset
Norberta Gomez, arsip
Nugroho Katjasungkana, riset/editorial
Orlando do Rego, logistik/supir

Palmira Carvalho, statistika
Pascoela da Costa, statistika
Pat Walsh, penasihat khusus/direktur eksekutif
Patrick Ball, statistika
Patrick Burgess, penasihat hukum utama
Paula Pinto, editorial
Penny Davies, arsip
Perpetua Sousa de Carvalho, pemasukan data
Peter Hoskings, dukungan korban
Peter Richardson, keuangan
Phyllis Ferguson, editorial
Piers Pigou, riset
Poriaman Sitanggang, fotografer
Rae Sheridan, pameran
Raimundo da Costa, administrasi
Remigia Viana, kesekretariatan
Remizio Soares, pembersih
Riamirta Dwiandini, penerjemahan
Ric Curnow, produksi video
Robin Taudevin, penulis
Romaldo Caetano, teknologi informasi
Romana Amelia Guterres, keuangan
Romesh da Silva, statistika
Rosario B. Amaral, statistika
Rosario de Araujo, dukungan program
Rose Magno, fotografer
Ross Clark, penulis
Rowan McRae, hukum
Salvador C. Amaral, logistik
Sancho Goncalves, pengambil pernyataan
Sandro Mendes Vong, logistik/supir
Sanne Van Den Bergh, riset/editorial
Santiago F. Belo, pembaca pernyataan/pemasukan data
Sebastiao do Rego Guterres, penerjemahan
Shakib Shahidian, penerjemahan
Sharon Riley, keuangan

Silvia V. D. S. Lopes, statistika
Simon Poppewell, editorial
Sophie Khan, riset
Stephanie Curran, editorial
Stephanie Lowe, produksi
Stephen Malloch, multimedia/teknologi informasi
Suryono, penerjemahan
Susana Barnes, pemrosesan data
Suzannah Linton, hukum
Suzannah Walsh, editorial
Teodoro Soares, riset
Teresa M. Abi Luis, rekonsiliasi
Teresa Maria de Carvalho, pengambilan pernyataan/pembaca pernyataan/
pemasukan data
Titi Irawati, informasi publik
Toby Gibson, desain grafis
Tomas Manuel Correia, audiensi publik
Valentina Yulitah Dyah Utari, penerjemahan
Vanessa Corine Hearman, penerjemahan
Wendy Nimmo, keuangan
Willy van Rooijen, keuangan
Zelda Grimshaw, editorial
Zelia Maria da Costa, koordinasi regional
Zulmira M. Fernandes, statistika

Pelaksanaan mandat CAVR ditingkat regional

Komisaris Regional

Alarico da Costa dos Reis, Ainaro
Albino da Silva, Lospalos
Aleixo Ximenes, Baucau
Ana de Fatima Cunha, Maliana
Ana Maria dos Santos, Liquiçá
Antonio Alves Fahik, Covalima
Antonio Hermenegildo da Costa, Oecussi
Arnold Sunny, Oecussi
Carolina M.E. do Rosario, Baucau

Daniel Sarmento Soares, Viqueque
Domingas dos Santos, Maliana
Eduardo de Deus Barreto, Ermera
Egídio Maia, Ermera
Filomena Barros Perreira, Ainaro
Francisco dos Reis Magno, Maliana
Francisco Martins, Aileu
Geraldo Gomes, Manatuto/kampanye
Helena H.C. Gomes, Viqueque
Idelfonso Perreira, Manatuto
Jaime da Costa, Manufahi
Jose Joanico Pereira dos Santos, Dili
Jose Antonio Ote, Oecussi
Justino Valentin, Lospalos/penulis
Maria Fernandes Mendes, Liquiçá
Maria Nunes, Covalima
Meta Mendonca, Aileu/produksi
Pedro de Correia Lebre, Dili
Saturnio Tilman, Manufahi
Teresinha Maria Cardoso, Dili

Staf Kantor Regional

Aileu

Rosa Tilman de J. Santos, koordinasi regional/riset
Vicente das Neves, keuangan
Felipe de Araujo, logistik/supir
Francisco Vila Nova, keuangan
Domingos Aleixo, keuangan

Baucau

Armando Marques, koordinasi regional/arsip
Arthur Egas M. Freitas, keuangan
Paul R. Perreira, logistik/supir
Julio Ximenes Ribeiro, koordinasi regional
Mario Soares, koordinasi regional
Fernando dos Reis, keuangan

Januario da Costa, keamanan
Joao da Costa, keamanan
Joao de Brito X. Lica, hubungan masyarakat/keamanan

Bobonaro

Adriano Joao, koordinasi regional/penulis
Marcelino das Dores Ferreira, keuangan
Alberto S. G. Torreza, logistik/supir
Julio de Deus, keamanan
Francisco Almeida, keamanan

Covalima

Francisco Duarte, koordinasi regional
Simao Luan, administrasi
Julio do Carmo, logistiks/supir
Salvador Cardoso Amaral, keamanan
Henrique M. de Jesus, keamanan

Dili

Januario Magalhaes, koordinator regional
Maria Pascoela S. Perreira, keuangan
Livio dos Santos, logistik/supir
Francisco Duarte Guterres, koordinator regional
Jose Cornelio Guterres, koordinator regional
Jacinto da C. S., logistik/supir
Joaquim J. Perreira, keamanan
Albino Fatima, keamanan

Oecussi

Domingos Naro, keuangan
Domingos de C. Ximenes, keamanan
Firminio Fuca, keamanan

Staf Distrik

Aileu

Anabela C. de Andrade, pengambil pernyataan
Candido Maria Alves, koordinator distrik

Daniel Koli, logistik/supir
Francisco Sales Sarmiento, hubungan masyarakat
Gastao Mendonca, pengambil pernyataan
Helia de Deus, pengambil pernyataan
Joanico da Silva, rekonsiliasi
Leonilda Barros Paixao, rekonsiliasi
Lordes da Silva, pengambil pernyataan
Maria Diamantina Martins, dukungan program
Martinho Rodrigues, pengambil pernyataan
Pedro Maia, pengambil pernyataan

Ainaro

Albertina R.B. Barros Amaral, pengambil pernyataan/pembaca data
Alberto da Reisureicao da S, koordinasi distrik
Alcino de Araujo, rekonsiliasi
Ana Maria Perreira, pengambil pernyataan
Arsenio Amaral, logistik/supir
Augusto Mendonca, pengambil pernyataan
Eduardo Almeida Barros, pengambil pernyataan
Martinha Ines Soi, rekonsiliasi
Silveira Maria de Araujo, dukungan korban
Tarcisio Mota, hubungan masyarakat

Baucau

Antonio F. Ximenes, hubungan masyarakat
Benvinda C. Rodrigues, pengambil pernyataan
Celestino D. C. Ximenes, koordinasi distrik/statistika
Cipriana Mendonca, pengambil pernyataan
Cristina Evonia Torres, dukungan korban
Jacinto H. Tomas, logistik/supir
Joana Aparicio G, dukungan korban
Juvinal E. Cabral, pengambil pernyataan/pembaca data
Lourenca Ximoes, rekonsiliasi
Manuel Tomas A. C., pengambil pernyataan/statistika
Sergio F. da Costa, rekonsiliasi
Virgina M.M. da Piedade, pengambil pernyataan

Bobonaro

Alfredo Cipriano Amaral, rekonsiliasi
Antonio Barreto Magno, pengambil pernyataan
Carmelita M. Amaral, pengambil pernyataan/statistika
Domingas Amaral Guterres, rekonsiliasi
Francisca Alzira, dukungan korban
Guilherme Goncalves Caeiro, koordinasi distrik/kampanye
Jose da Conceicao, hubungan masyarakat
Lambertus Koi Mau, logistik/supir
Marciana Goveia Leite, pengambil pernyataan/pembaca data
Roberto Gabriel, pengambil pernyataan/statistik

Covalima

Antonio Ximenes da Silva, logistik/supir
Bendita C. Barros, pengambil pernyataan
Cornelio Ferreira, rekonsiliasi
Filomena D.J. Moniz, pengambil pernyataan
Lidia do Carmo, rekonsiliasi
Lito da Costa Amaral, pengambil pernyataan
Maria B. de Deus, dukungan korban
mateus Alves, koordinator distrik
Thomas Barros, pengambil pernyataan
Vasco Cabecas de Araujo, hubungan masyarakat

Dili

Adriana Maria Candida Perreira, pengambil pernyataan/pembaca data
Agustinho de Rosa Fernandes Quintao, koordinator distrik
Ambrosio Graciano, pengambil pernyataan/pemasukan data
Charles de Carvalho Amaral, logistik/supir
Chiquito C. Guterres, rekonsiliasi/koordinator distrik/penulis/pemeriksa fakta
Duarte Goncalves, pengambil pernyataan/pembaca data
Jacinto D.S. Guterres, rekonsiliasi
Jorge H. de O. Martins, rekonsiliasi
Lolina Celeste, dukungan korban
Luizinha Ximenes G.A, dukungan korban
Natalino de J., hubungan masyarakat
Recardina Amaral de Araujo, pengambil pernyataan/pemasukan data

Ermera

Adriano Soares Lemos, pengambil pernyataan/pembaca data
Agusinho Soares, hubungan masyarakat
Antoninho S. Ximenes, rekonsiliasi
Fernanda A.P, pengambil pernyataan
Fernando Amado de Deus, logistik/supir
Jacinta A. Perreira, pengambil pernyataan
Mario Lopes, pengambil pernyataan
Maximiano C.L, logistik/supir
Romenia M. Perreira, dukungan korban
Valentin Rosario Babo, koordinator distrik
Virginia Perreira, rekonsiliasi

Lautém

Abilio Q. Pinto, pengambil pernyataan
Acacio dos Santos, koordinator distrik
Francisco dos Santos, rekonsiliasi
Gaspar de Sousa, pengambil pernyataan
Joao Vinhas, logistik/supir
Julio Maria de Jesus, hubungan masyarakat
Lolalina da C. Freitas, pengambil pernyataan
Marcelina de J. da Silva, pengambil pernyataan
Martinha da Costa Hornay, pengambil pernyataan/statistika
Octavio Ximenes, pengambil pernyataan/pemasukan data
Paula Jose Neves, dukungan korban
Serginha F. da Conceicao, rekonsiliasi

Liquiçá

Cristina A. Alves Liu, rekonsiliasi
Edelmiro Jose de Jesus, rekonsiliasi
Eurico dos Santos, pengambil pernyataan
Evaristo Paulo dos Santos, pengambil pernyataan/pemasukan data
Fatima L. Alves, pengambil pernyataan
Jaime Felipe Babo, logistik/supir
Jaimito Minezes, pengambil pernyataan
Joaquim Araujo dos Santos, hubungan masyarakat
Juvita Abuk; pengambil pernyataan

Liberata M. Filomena fos Santos, dukungan korban
Manuel Luis, hubungan masyarakat
Vicente de Jesus, koordinator distrik

Manatuto

Amelia Barros Gusmao, pengambil pernyataan/pembaca data
Carlito Pinto, pengambil pernyataan
Celestino Tomas Soares, koordinator distrik
Cesaltina B. Gomes, dukungan korban
Ciriaco da Costa, rekonsiliasi
David Xavier; hubungan masyarakat
Francisco Soares, logistik/supir
Jose Guterres Lay, pengambil pernyataan, statistika
Luciana Guterres, pengambil pernyataan
Maria Aguida Alves, dukungan korban
Rita G. Correia, rekonsiliasi

Manufahi

Abel Oliveira T. Belo, logistik/supir
Afonso Henrique C.M, koordinator distrik
Carlos Fernandes, hubungan masyarakat
Filipe Neri, pengambil pernyataan
Francisca M.M.D. Sarmento, pengambil pernyataan/pembaca data
Gregoriano P.P. Tilman, pengambil pernyataan
Laurindo Reis Fernandes, rekonsiliasi
Ligia Ferreira, rekonsiliasi
Robelia M.M.C, dukungan korban
Sancha Maria Xavier, pengambil pernyataan/pembaca data

Oecussi

Amelia Perreira, dukungan korban
Andre Lao, pengambil pernyataan/pembaca data
Brigida M. Napan, rekonsiliasi
Emilia Hornai, pengambil pernyataan
Fidelio Gonsalo Ribeiro, hubungan masyarakat
Francisco Colo, logistik/supir
Fredos Elo, pengambil pernyataan

Inacia Tamela, dukungan korban
Jacinta Goncalves, pengambil pernyataan/statistika
Jaime Corbafo, koordinator distrik
Januari Nesi, rekonsiliasi

Viqueque

Alzira dos Santos, pengambil pernyataan/pembaca data
Arthur Mario, pengambil pernyataan/statistika
Helena Soares, rekonsiliasi
Henrique M.L. Pinto, koordinator distrik
Jose Moniz, logistik/supir
Jose S. Amaral, rekonsiliasi
Napoleao de Almeida, pengambil pernyataan
Olimpia da Silva, dukungan korban
Pascoal G. Martins, hubungan masyarakat
Rosa de Jesus, pengambil pernyataan

Dewan Penasihat

Ana Pessoa
Bishop Alberto Ricardo da Silva
Bishop Basilio do Nascimento
Bishop Carlos Felipe Ximenes Belo, SDB
Ian Martin
Jose Ramos-Horta
Maria Fatima Gomes
Mary Robinson
Munir Said Thalib
Saparinah Sadli
Sergio Vieira de Mello

Mereka yang memberi pernyataan pada CAVR

Sebanyak 7.824 orang dari seluruh penjurur Timor-Leste memberi pernyataan kepada CAVR tentang pengalaman mereka pada periode mandat CAVR. Nama-nama mereka tidak dicantumkan di sini karena ruang yang ada tidak mencukupi dan untuk menghargai kerahasiaan yang telah diminta oleh sebagian orang yang memberi pernyataan kepada CAVR.

CAVR ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada setiap orang yang telah memberi pernyataan pada CAVR, yang telah membantu kami untuk mengungkapkan fakta dan mencari kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama periode mandat.

Mereka yang berpartisipasi dalam PRK

Sebanyak 1.541 orang memberi pernyataan pada Proses Rekonsiliasi Komunitas. 1.371 dari mereka selesai menjalankan proses audiensi PRK. Sekali lagi, karena alasan karena ruang yang tidak mencukupi dan asas kerahasiaan nama-nama mereka tidak dicantumkan disini.

CAVR ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada setiap orang dan komunitas yang telah berpartisipasi dalam Proses Rekonsiliasi Komunitas.

Peserta lokakarya pemulihan

Ainaro

Agapito Xavier
Ana Maria
Angelina da Costa
Bendita da Silva
David Rodrigues
Esperanca Mendonca
Felismina Araujo
Fernanda da Costa
Jacinta da Silva
Margarida Pereira
Martinha da Costa
Olga Corte-Real

Aileu

Antonia Sarmiento
Cornelio Soares Pinto
Evaristo Moniz
Gaspar Belo
Joana Martins
Joao Baptista
Joao Mendonca
Jose da Costa
Juliana Martins
Marcos Exposto
Martinho da Costa
Moises da Costa Braz
Odelia Frederico
Terezinha Lere Brito

Baucau

Alberto Freitas
Celestina Guterres
Deolindo Hornai Ximenes
Domingas Sebastiana
Domingos da Costa
Etelvina Ximenes
Filomena Belo
Joaquina dos Reis Gaio
Maria Teresa
Rosa Belo
Teresa Belo

Covalima

Albertina Rica
Ana Amaral
Jose Braz Tilman
Maria Cardoso
Maria da Costa
Martinha Amaral

Olinda de Araujo
Romao Clementino
Rosa Colo Bere
Rosalina Moniz
Rosalinda Abuk
Salvador Gusmao
Vitoria Cardoso

Dili

Acacio da Costa Carvalho
Antonio Lima
Aquino Pereira
Berta Soares
Carlos Barreto
Cristovao Paixao
Filomena Alves
Floriana Nunes Saldanha
Geronimo Ximenes
Hilaria Olandina C.
Ines de Carvalho
Joao Bosco Pinto
Jose Amaral
Jose Nunu Lopes
Jose Soares
Maria Araujo Alves
Maria Lucia
Rita de Oliveira
Rofino Soares
Romeo da Conceição
Silveiro Martins

Ermera

Abrao Aleixo Conceição
Adriano Soares
Alda Babo
Alda Martins

Carlito Soares
Delfin Pereira
Felixberto S. M. Ximenes
Imaculada da Conceição
Juliana da Cruz
Juliana Soares
Luis Tilman
Luiza Doutel Pereira
Olandina dos Santos
Rafael Freitas
Rosita Madeira

Lautém

Amelia da Costa
Angelina da Silva
Antonio Miranda
Casimiro Justo dos Santos
Cristina Quimaraes
Eudosia da Costa
Felixberta Madeira
Jeremias dos Reis
Joana Pinto
Luis da Costa
Luis Mouzinho
Maria Martins
Maria Ornai
Marta Ximenes
Regina Freitas
Sita Jeronimo
Zeferino Freitas

Liquiçá

Celestina Soares
Domingos Santana Cardoso
Florindo de Jesus
Humberto Afonso

Jose da Silva
Manuel S. Lopes
Roberto Nunes
Virginia dos Santos

Maliana

Angelina Nunes
Bernadino Loe Leto
Fernando Gusmao
Flaviano Daubere
Jacob dos Santos
Luis Afonso
Maria Belo Asis
Maria Soares
Mario Bereceu
Mario Goncalves
Olandina Veronica
Sabina Marcelo Martins
Veronica Moniz

Manatuto

Adriano Pereira
Beatris Soares
Joana da Costa
Joana da Costa
Joao da Cunha
Jose dos Santos
Lurdes Esperito Santos
Maria Jose
Olinda
Victor de Jesus

Manufahi

Carlito da Costa
Alarico dos Santos
Amandi da Costa

Camelia da Costa
Lucia de Jesus
Mateus Torejao
Mateus da C. Amaral
Oecussi
Fatima Aban
Filomena Elu
Jacinta Abi
Manuel Infen
Marcelina Poto
Paulina Foni
Teresa Sila

Viqueque

Aquelina
Daniel da Silva
Etelvina da Costa Guterres
Mateus Soares
Placido
Raimundo Ruas
Saturlina Ximenes
Sixto Fernandes

Daftar istilah dan singkatan

| Singkatan/istilah | Kepanjangan | Keterangan/Terjemahan |
|---------------------------------|--|--|
| <i>a política comanda fuzil</i> | | politik memerintah senjata |
| ABC | Australian Broadcasting Corporation | |
| ABITL | Asosiasaun Biblioteka no Informasaun Timor-Leste | Asosiasi Perpustakaan dan Informasi Timor-Leste |
| ABLAJ | Aku Berjuang Laksanakan Amanat Integrasi | Milisi dari Same |
| ABRI | Angkatan Bersenjata Republik Indonesia | Setelah restrukturisasi 1 April 1999, disebut Tentara Nasional Indonesia (TNI) |
| ACET | Australian Coalition for East Timor | Jaringan Solidaritas Australia untuk Timor-Leste |
| ACFID | Australian Council for International Development | |
| ACFOA | Australian Council for Overseas Aid | |
| Aditla | Associação Democrática para a Integração de Timor Leste na Austrália | Asosiasi Demokratis untuk Integrasi Timor-Leste ke dalam Australia |
| AETA | Australia East Timor Association | |
| AFFET | Australian for a Free East Timor | |
| AHC | Australian High Commission | |
| AHI | Alieu Hametin Integrasi | Alieu Memperkuat Integrasi (milisi dari Alieu) |
| AI | Amnesty International | |
| AIETD | All-Inclusive intra-East Timorese Dialogue | Dialog Menyeluruh Antar-orang Timor |
| Aitarak | | Berarti "duri" (milisi dari Dili) |
| AKSI | Aksi Solidaritas Indonesia | Kelompok solidaritas Australia untuk Indonesia |
| ALP | Australian Labor Party | Partai Buruh Australia |
| ANC | African National Congress | Kongres Nasional Afrika |
| <i>Apartidarismo</i> | | tradisi militer Portugis untuk berada di luar politik |
| APCET | Asia-Pacific Coalition for East Timor | Koalisi Asia-Pasifik untuk Timor-Leste, kelompok solidaritas yang berbasis di Filipina |
| APEC | Asia Pacific Economic Co-operation | Kelompok Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| APIK | Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan | |
| Apodeti | Associação Popular Democrática Timorese | Asosiasi Demokratik Populer Timor |
| <i>arma branca</i> | | pasukan putih, disebut juga <i>força popular</i> , unit pertahanan sipil |
| ARMUI | Atabae Rela Mati untuk Integrasi | Milisi dari Atabae |
| ASA | Asia Students' Association | Asosiasi Pelajar Asia, kelompok solidaritas yang berbasis di Hong Kong |
| ASDT | Associação Popular Democrática Timorese | Perkumpulan Kerakyatan Demokratik Timor |
| ASEAN | Association of Southeast Asian Nations | Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara |
| Asintel | Asisten Intelijen | |
| ASSEPOL | Association of Ex-political Prisoner | Asosiasi mantan tahanan politik |
| <i>Assistente Comissariado</i> | | asisten komisariat |
| ASTO | Association de Solidarite avec Timor-Oriental | Asosiasi Solidaritas Bersama Timor-Leste, kelompok solidaritas Timor-Leste berbasis di Prancis |
| AW | Asia Watch | |
| AWD | Action for World Development | LSM Australia |
| | | |
| Babinsa | Bintara Pembina Desa | |
| BAe | British Aerospace | |
| Bais | Badan Intelijen Strategis | |
| Bakin | Badan Koordinasi Intelijen Negara | |
| BAP | Berita Acara Pemeriksaan | |
| Bappeda | Badan Perencana Pembangunan Daerah | |
| <i>bases de apoio</i> | | basis resistansi |
| BBC | British Broadcasting Corporation | |
| BCET | British Coalition for East Timor | Jaringan Solidaritas Inggris |
| BCIET | British Campaign for an Independent East Timor | Kelompok solidaritas Inggris (pra-1980) |
| BENETECH | Beneficent Technology | Organisasi analisis data, berbasis di Amerika Serikat |
| Binpolda | Bintara Polisi Desa | |
| BKKBN | Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional | |
| BMP | Besi Merah Putih | Milisi dari Liquiçá |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| BP7 | Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila | |
| BPS | Biro Pusat Statistik | |
| Brichoq | Brigada de Choque | Brigade Gerak Cepat |
| <i>Brigada Dinamisdora</i> | | Brigade Dinamisor |
| Brimob | Brigade Mobil | |
| BRTT | Barisan Rakyat Timor Timur | Pro-otonomi |
| BTT | Batalion Tenaga Teritorial | |
| | | |
| CAA | Community Aid Abroad | |
| CAAT | Campaign Against the Arms Trade | LSM Inggris |
| <i>Cartão Salva Conduto</i> | | "Kartu Perlakuan Aman", digunakan oleh Fretilin semasa konflik internal 1975 |
| CAVR | Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação | Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi |
| CAWG | Canada Asia Working Group | Kelompok Kerja Asia-Kanada |
| CCF | Comite Central Fretilin | Komite Sentral Fretilin |
| CCR | Centre for Constitutional Rights | Pusat Hak Konstitusional, Amerika Serikat |
| CCT | Centro para a Cidadania Timorese | Pusat Kewarganegaraan Timor, kelompok bantuan, berbasis di Portugal |
| CDPM | Comissão para os Direitos do Povo Maubere | Komisi untuk Hak-hak Rakyat Maubere (kelompok solidaritas Portugis) |
| CDR | Comité Democrático Revolucionária | Komite Demokratis Revolusioner |
| CE | Comité Executivo, atau Comité Executivo da CNRM na Frente Clandestina | Komite Eksekutif atau Komite Eksekutif CNRM bagi Front Klandestin |
| CEDAW | Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women | Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan |
| Ceforpol | Centro da Formação Política | Pusat Pendidikan Politik |
| Celcom | Celula de Comunidade | Sel Masyarakat |
| CEL/FA | Comité Executivo da Luta/Frente Armada | Komite Eksekutif Perjuangan/Front Bersenjata |
| CEL/FC | Comité Executivo da Luta/Frente Clandestina | Komite Eksekutif Perjuangan/Front Klandestin |
| CEP | Community Empowerment Project | Proyek Pemberdayaan Komunitas, didanai oleh TFET dan dikelola oleh Bank Dunia |
| <i>Centro de Instrução</i> | | pusat pelatihan tentara |
| <i>cerco e aniquilamento</i> | | pengepungan dan pemusnahan |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Cernac | Centros da Resistência Nacional | Pusat Resistansi Nasional |
| Cezo | Comité Executivo da Zona | Komite Eksekutif Zona |
| CIA | Central Intelligence Agency | Organisasi pemerintah Amerika Serikat |
| CIDAC | Centro de Informação e Documentação Amílcar Cabral | Pusat Dokumentasi dan Informasi Antikolonial, di Portugal |
| CIET | Campaign for an Independent East Timor | Kampanye Timor-Leste Merdeka, berbasis di Australia dan Inggris |
| CIIR | Catholic Institute for International Relations | Lembaga Katolik untuk Hubungan Internasional, berbasis di Inggris |
| CNRM | Conselho Nacional da Resistência Maubere | Dewan Nasional Resistansi Maubere |
| CNRT | Conselho Nacional de Resistência Timorese | Dewan Nasional Resistansi Rakyat Timor |
| <i>comandante da zona</i> | | komandan zona |
| <i>comando da região</i> | | komando region |
| <i>comando da zona</i> | | komando zona |
| <i>comando de sector</i> | | komando sektor |
| <i>Comissão de Inquérito</i> | | Komisi Penyelidikan |
| <i>Comissário Político Nacional</i> | | Komisaris Politik Nasional |
| <i>Companhias</i> | | kompi |
| CPA | Communist Party of Australia | Partai Komunis Australia |
| CPCC | Comissão de Planeamento e Coordinação de Capanha | Komisi untuk Perencanaan dan Koordinasi Kampanye |
| CPN | Comissão Política Nacional | Komisi Politik Nasional |
| CPD-RDTL | Conselho Popular de Defesa Republica de Timor-Leste | Dewan Pertahanan Populer Republik Timor-Leste |
| CPLP | Comunidade dos Países de Língua Portuguesa | Komunitas Negara-negara Berbahasa Portugis |
| CRC | Convention on the Rights of the Child | Konvensi Hak Anak, PBB |
| <i>Crèche</i> | | tempat penitipan anak |
| <i>Crítica - auto crítica</i> | | kritik-otokritik |
| CRNJT | Comissão do Resistência Nacional do Jovem de Timor-Leste | Komisi Timor-Leste untuk Resistansi Pemuda Nasional |
| CRRN | Conselho Revolucionario de Resistência Nacional | Dewan Revolusioner Resistansi Nasional |
| CRS | Catholic Relief Services | LSM, berpusat di Amerika Serikat |
| CSIS | Centre for Strategic and International Studies | Berpusat di Jakarta |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| CSRNET | Comissão Secreto da Resistência Nacional dos Estudantes Timorese | Komisi Rahasia Resistansi Nasional Pelajar/Mahasiswa Timor-Leste |
| Curlog | Penghancuran Logistik | Operasi militer untuk menghancurkan pasokan Falintil, setelah 1984 |
| Dandim | Komandan Kodim | |
| Danramil | Komandan Koramil | |
| Danton | Komandan Peleton | |
| DDII | Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia | |
| DEF | Delegação Externa da Fretilin | Delegasi Luar Negeri Fretilin |
| Depnaker | Departemen Tenaga Kerja | |
| <i>Despartidarização</i> | | pemutusan hubungan kepartaian |
| DFSE | Delegação da Fretilin em Serviço no Exterior | Fretilin dalam Tugas Luar Negeri |
| DMP | Dadurus Merah Putih | Kibaran Merah Putih, milisi dari Maliana |
| Dolog | Depot Logistik | |
| DOPI | Departemento da Orientação Política e Ideológica | Departemen Orientasi Politik dan Ideologi |
| DPR | Dewan Perwakilan Rakyat | |
| DPRD | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | |
| DRSE | Delegação da Resistência em Serviço no Exterior | Delegasi Resistansi dalam Tugas Luar Negeri |
| DSMPTT | Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor-Timur | |
| ECHO | European Commission Humanitarian Office | Komisi Eropa Kantor Humaniter |
| ECHR | European Court of Human Rights | Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia |
| EEC | European Economic Community | Komunitas Ekonomi Eropa |
| ELSAM | Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat | |
| <i>Equipa</i> | | kelompok kerja |
| <i>Escuteiro</i> | | Kepanduan Katolik |
| <i>Estado Maior das Falintil</i> | | Staf Umum Falintil |
| Estafeta | | Kurir klandestin untuk Resistansi |
| ETISC | East Timor Ireland Solidarity Campaign | |
| ETADEP | East Timor Agriculture and Development Project | Proyek Pembangunan dan Pertanian Timor Timur, LSM Timor-Leste |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| ETAN/Canada | East Timor Alert Network | Kelompok solidaritas Kanada |
| ETAN/US | East Timor Action Network | Kelompok solidaritas Amerika Serikat |
| ETCJ | East Timor Coalition Japan | Kelompok solidaritas Jepang |
| ETHRC | East Timor Human Rights Centre | Kelompok pemantau masalah hak asasi manusia, berbasis di Australia |
| ETSSC | East Timor Students Solidarity Council | <i>lihat</i> DSMPTT |
| ETRA | East Timor Relief Association | Kelompok solidaritas Australia |
| ETTA | East Timor Transitional Administration | Dibentuk semasa misi UNTAET |
| ET-WAVE | East Timorese Women against Violence and for Child Care | LSM Perempuan Timor-Leste |
| EU | European Union | Uni Eropa |
| | | |
| FADE | Forças Auto Defesa | Pasukan Pertahanan-diri (Timor-Leste) |
| Falintil | Forças Armada de Libertação Nacional de Timor-Leste | Tentara Bersenjata Pembebasan Nasional Timor-Leste |
| FBP | Fabrica de Braco de Prata | Pistol Portugis (digunakan semasa konflik internal) |
| FD | Frente Diplomatica | Front Diplomatik (Timor-Leste) |
| FDTL | Forças de Defesa de Timor-Leste | Pasukan Pertahanan Timor-Leste |
| Felectil | Frente Estudantil Clandestina de Timor-Leste | Front Pelajar/Mahasiswa Klandestin Timor-Leste |
| FET | Friends of East Timor | Sahabat Timor-Leste, kelompok solidaritas Australia, berbasis di Perth |
| FNLA | Frente Nacional para a Libertação de Angola | Front Nasional Pembebasan Angola |
| Fokupers | Forum Komunikasi untuk Perempuan Lorosae | |
| <i>Força Auto Defesa</i> | | Pasukan Pertahanan |
| Forsarepetil | Forum Sarjana Pro-Referendum dan Pembangunan Timor-Leste | |
| Forsolidareste | Forum Solidaritas Timor-Leste | |
| Fortilos | Forum Solidaritas Rakyat Timor Lorosae | |
| FDPK | Forum Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan | |
| FPI | Frente Politico Internal | Front Politik Dalam Negeri |
| Frelimo | Frente de Libertação de Moçambique | Front Pembebasan Mozambik |
| Frente Armada | | Front Perjuangan Bersenjata |
| Frente Clandestina | | Front Perjuangan Klandestin |
| Frente Diplomática | | Front Perjuangan Diplomatik |
| Fretilin | Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente | Front Revolusioner Timor-Leste Merdeka |

| | | |
|------------|--|---|
| G3 | | Senapan G3, senapan standar yang dikeluarkan NATO, aslinya buatan Heckler&Koch dari Jerman, digunakan oleh militer Portugis |
| Gadapaksi | Garda Muda Penegak Integrasi | Kadang disebut juga sebagai 'Garda Paksi' atau 'Gardapaksi' |
| Golkar | Golongan Karya | |
| GPK | Gerakan Pengacau Keamanan | Istilah Indonesia untuk Fretilin/Falintil. |
| GUETISG | Glasgow University East Timor and Indonesia Support Group | |
| Halilintar | | Milisi dari Bobonaro |
| HAM | Hak Asasi Manusia | |
| Hansip | Pertahanan Sipil | |
| HPPMAI | Himpunan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Anti-Integrasi | |
| HRDAG | Human Rights Data Analysis Group | Kelompok Analisis Data Hak Asasi Manusia |
| HRVD | Human Rights Violations Database | Basis data pelanggaran hak asasi manusia |
| HRW | Human Rights Watch | |
| IAPC | Indonesia Australia Programme for Cooperation | Program Kerjasama Indonesia Australia |
| ICCPR | International Covenant on Civil and Political Rights | |
| ICESCR | International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights | |
| ICIET | International Commission of Inquiry on East Timor | Penyelidik Internasional atas Timor-Leste |
| ICJ | International Court of Justice | Mahkamah Internasional |
| ICRC | International Committee of the Red Cross | Komite Internasional Palang Merah |
| ICTJ | International Center for Transitional Justice | Berbasis di New York |
| IDP | Internally Displaced Persons | Pengungsi internal |
| IETP | Indonesia East Timor Programme | |
| IFET | International Federation for East Timor | Jaringan solidaritas global |
| IGGI | Inter-governmental Group on Indonesia | Konsorsium bantuan multilateral untuk Indonesia |
| IMF | International Monetary Fund | Dana Moneter Internasional |

| | | |
|---------------|---|--|
| Imparsial | | Organisasi yang bergerak di bidang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. |
| Impettu | Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur | |
| INFID | International NGO Forum on Indonesian Development | |
| Infight | Indonesian Front for Human Rights | |
| Interfet | International Force for East Timor | Pasukan internasional PBB, tiba di Timor-Leste pada 20 September 1999 |
| IOM | International Organisation for Migration | Organisasi Migrasi Internasional |
| IPJET | International Platform of Jurists for East Timor | Kelompok solidaritas Belanda |
| IPTL | Igerja Protestante Timor-Leste | Gereja Protestan di Timor-Leste |
| IRC | International Refugee Council | |
| IWGIA | International Working Group on Indigenous Affairs | Berbasis di Denmark |
| JAM | Joint Assessment Mission | Misi yang dikelola oleh Bank Dunia, dibentuk pada September 1999 untuk menilai apa saja kebutuhan Timor-Leste |
| JCCJP | Japan Catholic Council for Peace and Justice | |
| JCDET | Joint Committee for the Defense of East Timor | LSM Indonesia |
| JICA | Japanese International Co-operation Agency | |
| JKPIT | Jaringan Kesehatan Perempuan Indonesia Timur | |
| JRS | Jesuit Refugee Services | |
| JSMP | Justice System Monitoring Program | |
| Kaditsospol | Kepala Direktorat Sosial Politik | |
| Kaixa | Kaixa Central | Secara harfiah berarti "kotak": suatu unit dalam jaringan Klandestin yang berfungsi menyediakan bantuan logistik |
| Kapolsek | Kepala Polisi Sektor | |
| Kapolwil | Kepala Kepolisian Wilayah | |
| Kasdim | Kepala Staf Kodim | |
| Kasi I | Kepala Seksi I (Intelijen) | |
| <i>katuas</i> | | para tetua |

| | | |
|---------------------|--|---|
| Kiper | Komite Independen Pemantau Suara | |
| KIN | Koordinasi Intelijen Nasional | |
| KMP | Kaer Metin Merah Putih | Pegang Erat Merah Putih (milisi dari Bobonaro) |
| Kodam | Komando Daerah Militer | |
| Kodim | Komando Distrik Militer | |
| Kolakops | Komando Pelaksanaan Operasi | |
| Komnas HAM | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | |
| Kontras | Komisi untuk Orang-orang Hilang dan Korban Kekerasan | |
| Kopassandha | Komando Pasukan Sandhi Yudha | Komando perang rahasia, pasukan khusus, 1971 – 1986 |
| Kopassus | Komando Pasukan Khusus | 1986 – sekarang |
| Kopkamtib | Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban | |
| Koramil | Komando Rayon Militer | |
| Korpri | Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| Kostrad | Komando Cadangan Strategis AD | |
| KOTA | Klibur Oan Timor Aswain | Perkumpulan Ksatria Putra Timor |
| Kotis | Komando Taktis | |
| Kowil | Komando Wilayah | |
| KPN | Komisi Penyelidikan Nasional | |
| KPPHAM | Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM | Diadakan untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Timor-Leste |
| KPS | Komisi Perdamaian dan Stabilitas | |
| KUHAP | Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana | |
| KUHP | Kitab Undang-undang Hukum Pidana | |
| KUHPM | Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer | |
| Laksaur | | Milisi dari Covalima |
| <i>Levantamento</i> | | pemberontakan |
| Linud | Lintas Udara | |
| LIPI | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | |
| LP | Lembaga Pemasyarakatan | |

| | | |
|--|--|---|
| LKMD | Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa | |
| M-16 | | Senapan otomatis buatan Amerika Serikat yang digunakan oleh militer Indonesia |
| Mahidi | Mati Hidup Demi Integrasi | Milisi dari Ainaro |
| Mamtim | Mahasiswa Muslim Asal Timor Timur | |
| <i>Manual e Programa Politicos da Fretilin</i> | | Pedoman dan Program Politik Fretilin |
| <i>mata dalam</i> | | pemimpin |
| Maubere | | Istilah yang dipakai oleh Fretilin pada 1974 untuk mengacu kepada masyarakat Timor biasa. |
| MFA | Movimento das Forças Armadas | Gerakan Angkatan Bersenjata, bertanggung jawab menggulingkan rezim Portugis Salazar-Caetano pada 25 April 1974. |
| Miplin | Milicia Popular de Libertacao Nacional | Milisi Rakyat untuk Pembebasan Nasional |
| MMIETS | Mary McKillop Institute of East Timor Students | LSM Australia |
| MoU | Memorandum of Understanding | Catatan perjanjian |
| MPLA | Movimento Popular de Libertação de Angola | Gerakan Populer Pembebasan Angola |
| MPR | Majelis Permusyawaratan Rakyat | |
| MSF | Médecins Sans Frontières | Dokter Lintas-Batas |
| Mudika | Muda-mudi Katolik | |
| MUITD | Movimento para Unidade e Independência de Timor-Dili | Gerakan untuk Persatuan dan Kemerdekaan Rakyat Timor |
| Nanggala | | Kode untuk Kopassus |
| NATO | North Atlantic Treaty Organization | |
| NCCJP | Netherlands Catholic Commission for Justice and Peace | |
| Nurep | Nucleo da Resistência Popular | Inti Resistansi Rakyat, struktur klandestin di tingkat desa. |
| OCR | Organização Coordenadora Inter-Regional | Organisasi Koordinasi Antar-Wilayah |
| ODIR | Orgão Directiva Regional | Organ Pengarah Regional |
| OHCHR | Office of the High Commissioner of Human Rights | Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (di PBB) |
| OJETIL | Organização da Juventude e dos Estudantes de Timor-Leste | Organisasi Pemuda dan Pelajar dari Timor-Leste |

| | | |
|--|---|--|
| OPB | Operasi Pagar Betis | Disebut juga dengan Operasi Kikis, operasi militer Indonesia pada awal 1980-an |
| OPJT | Organização Popular Juventude de Timor | Organisasi Rakyat Pemuda Timor |
| OPMT | Organização Popular de Mulher Timor | Organisasi Rakyat Perempuan Timor |
| OPS | Organização Popular de Segurança | Organisasi keamanan |
| Opsus | Operasi Khusus | |
| OSIS | Organisasi Siswa Intra-Sekolah | |
| OV-10 | OV-10A Bronco | Pesawat terbang ringan buatan Amerika Serikat yang digunakan oleh militer Indonesia. |
| | | |
| Pangdam | Panglima Kodam | |
| Pasmar | Pasukan Maritim | |
| <i>A Paz é Possível em Timor-Leste</i> | | Perdamaian Mungkin Dicapai di Timor-Leste, kelompok solidaritas Portugis |
| PBHI | Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia | |
| PCI | Pax Cristi International | |
| PDI-P | Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan | |
| <i>pelotões</i> | | peleton |
| Permesta | Perjuangan Rakyat Semesta | Gerakan separatis dari Sulawesi Utara |
| PGI | Persatuan Gereja Indonesia | |
| PIDE | Polícia Internacional de Defesa do Estado | Polisi Internasional untuk Pertahanan Negara, polisi rahasia Portugis |
| PIJAR | Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi | Kelompok solidaritas Indonesia |
| Pikul | Pengembangan Institusi dan Kapasitas Lokal | LSM Indonesia |
| PKF | Peacekeeping Forces | Pasukan Perdamaian PBB |
| PKI | Partai Komunis Indonesia | |
| PKK | Program Kesejahteraan Keluarga | |
| PMLF | Partido Marxista-Leninista Fretilin | Partai Marxis-Leninis Fretilin |
| PMP | Pendidikan Moral Pancasila | |
| PNT | Partido Nacionalista Timorese | Partai Nasionalis Timor |
| PNTL | Polícia Nacional Timor-Leste | Polisi Nasional Timor-Leste |
| POKASTIM | Kelompok Kerja Kesejahteraan dan Pendidikan Timor Timur | Kelompok solidaritas Indonesia |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Polda | Polisi Daerah | |
| Polri | Polisi Republik Indonesia | |
| Polsek | Polisi Sektoral | |
| Polres | Polisi Resort | |
| Polwil | Polisi Wilayah | |
| POM | Polisi Militer | |
| PPATN | Panti Penyantunan Anak Taruna Negara | |
| PPI | Pasukan Pejuang Integrasi | |
| PR | Pax Romana | Organsiasi Perdamaian Katolik |
| Prada | Prajurit Dua | |
| Pratu | Prajurit Satu | |
| PRD | Partai Rakyat Demokratik | |
| PRK | Prosedur Rekonsiliasi Komunitas | Salah satu mandat CAVR |
| <i>Propriedade estatal</i> | | Lahan milik negara |
| Protap | Prosedur Tetap | |
| PRRI | Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia | |
| PSD | Partido Social Democratica | Di Timor-Leste |
| PSDC | Partido Social Democrata Cristão | Partai Sosial Demokratik Kristen (Guinea Bissau) |
| Puskesmas | Pusat Kesehatan Masyarakat | |
| | | |
| Quartel Geral | | Markas besar militer Portugis di Dili |
| | | |
| RAFT | Reunite in Australia the Families of East Timor | Kelompok solidaritas yang berbasis di Melbourne |
| Ratih | Rakyat Terlatih | |
| RDT-L | Republica Democratica Timor-Leste | Republik Demokratik Timor-Leste |
| Renal | Rehabilitação Nacional | Pusat penahanan Fretilin, 1976 - 1979 |
| Renetil | Resistência Nacional Estudantes de Timor-Leste | Resistansi Nasional Pelajar/Mahasiswa Timor-Leste |
| Repelita | Rencana Pembangunan Lima Tahun | |
| RER | Reajustamento Estrutural da Resistência e Proposta da Paz | Penyesuaian-Ulang Struktural Resistansi dan Usulan Perdamaian |
| RK | Rukun Keluarga | Setingkat di atas RT |
| RMS | Retrospective Mortality Survey | Survei Tingkat Kematian Retrospektif |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| RPKAD | Resimen Para-Komando Angkatan Darat | Nama Pasukan Khusus sebelum menjadi Kopassandha |
| RT | Rukun Tetangga | |
| RTP | Resimen Tim Tempur | |
| SAETA | Sydney Australia East Timor Association | |
| Sagrada Familia | | "Keluarga Suci" – organisasi klandestin kuasi-religius |
| Sakunar | | Kaljengking, milisi dari Oecussi |
| Sang Tai Hoo | | Bekas toko Cina yang dipakai oleh militer Indonesia sebagai pusat penahanan |
| SAPT | Sociedade Agricola Patria e Trabalho | Perusahaan pertanian Portugis yang beroperasi di Timor-Leste semasa kolonial. |
| SARET | Special Autonomous Region of East Timor | |
| Satgas | Satuan Tugas | |
| Satgas Intel | Satuan Tugas Intelijen | |
| Satgas P3TT | Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur | |
| Satpur | Satuan Tempur | |
| SCU | Serious Crimes Unit | Unit Kejahatan Berat, dibentuk oleh UNTAET; setelah kemerdekaan Timor-Leste, dimasukkan dalam struktur Kantor Jaksa Agung. |
| Sekwilda | Sekretariat Wilayah Daerah | |
| SGI | Satuan Gabungan Intelijen | Sampai 1993. |
| Simonov | Senapan Simonov | Senapan semi-otomatis Rusia, digunakan oleh polisi Indonesia |
| Solidamor | Solidaritas Indonesia untuk Perdamaian Timor Timur | |
| SPRIM | Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere | |
| SRSG | Special Representative of the Secretary General | Wakil Khusus Sekretaris Jenderal |
| <i>Sub Chefe do Estado Maior</i> | | Wakil Kepala Staf |
| <i>suicidio ideológico</i> | | 'bunuh diri ideologis' |
| Susenas | Survei Sosial Ekonomi Nasional | |

| | | |
|-------------|---|--|
| TAPOL | Tahanan Politik | Juga merupakan nama kelompok yang berbasis di London, yang memaparkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia |
| TFET | Tenaga Bantuan Operasi | Anak-anak dan kaum lelaki yang digunakan oleh ABRI sebagai pengangkut barang, pembantu, dsb. |
| TFET | Trust Fund for East Timor | Dikelola oleh Bank Dunia |
| Tim Alfa | | Milisi dari Lospalos |
| Tim Saka | | Kelompok paramiliter Baucau yang menjadi milisi pada 1999. |
| Tim Sera | | Kelompok paramiliter Baucau yang menjadi milisi pada 1999. |
| TIS | Timor Information Service | Layanan Informasi Timor, LSM Australia |
| TKTB | Tim Kemanusiaan Timor Barat | |
| TNI | Tentara Nasional Indonesia | |
| Tokodede | | Bahasa yang dipakai di Distrik Liquiçá |
| Trabalhista | Partido Trabalhista | Partai Buruh (Timor-Leste) |
| TPD | Tim Pembina Desa | |
| TPPP | Tim Pelaksana Pembangunan Pusat | |
| TPR | Tentara Pembebasan Rakyat | |
| TVTL | Televisi Timor-Leste | |
| UDHR | Universal Declaration of Human Rights | |
| UDT | União Democrática Timorese | Uni Demokratik Timor |
| UNAA | United Nations Association of Australia | |
| UNAMET | United Nations Mission in East Timor | Misi PBB yang dibentuk untuk melaksanakan Konsultasi Rakyat pada 30 Agustus 1999 |
| UNATIL | Universidade Nacional Timor-Leste | Nama universitas tertua di Dili setelah 1999 (sebelumnya Untim) |
| UNHCR | United Nations Commission on Human Rights | |
| UNDP | United Nations Development Program | |
| Unetim | União Nacional dos Estudantes de Timor | Persatuan Nasional Pelajar Timor |
| UNFPA | United Nations Population Fund | |
| UNHCHR | United Nations High Commissioner for Human Rights | |
| UNHCR | United Nations High Commissioner for Refugees | |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| UNICEF | United Nations Children's Fund | |
| UNITA | União Nacional para a Independência Total de Angola | Persatuan Nasional untuk Kemerdekaan Penuh Angola |
| Unidade Nacional | | Persatuan Nasional |
| UNMISET | United Nations Mission of Support in East Timor | 20 Mei 2002 – 19 Mei 2005 |
| UNSCD | United Nations Special Committee on Decolonisation | |
| UNTAET | UN Transitional Administration in East Timor | 25 Oktober 1999 – 19 Mei 2002 |
| UNTAS | Unidades Timor Asswain | Persatuan Ksatria Timor |
| Untim | Universitas Timor TImur | Nama lama universitas tertua di Dili (sebelum 2000) |
| USAID | U.S. Agency for International Development | |
| <hr/> | | |
| <i>vias de canais</i> | | Saluran penghubung |
| <hr/> | | |
| Wanra | Perlawanan Rakyat | |
| WB | World Bank | Bank Dunia |
| WCC | World Council of Churches | |
| WFP | World Food Programme | |
| WHO | World Health Organisation | |
| WTO | World Trade Organisation | |
| WV | World Vision | |
| <hr/> | | |
| YAKIN | Yayasan Kesejahteraan Islam Nasrullah | |
| Yayasan HAK | Yayasan Hukum, Hak Asasi, dan Keadilan | |
| YLBHI | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia | |
| Yon Armed | Yonif Artileri Medan | |
| Yonif | Batalion Infanteri | |
| <hr/> | | |
| Zipur | Zeni Tempur | |
| <i>zonas liberas</i> | | zona bebas |

Indeks

5 Mei, Kesepakatan 159, 304, 315 - 322,
325, 326, 328, 422, 439, 669, 699,
770, 1169, 1173, 1198, 1247, 1928,
1930, 1932, 2547, 2631, 2635, 2651,
2652, 2653

12 November, Peristiwa. *Lihat* Santa
Cruz, Pembantaian

A

a política comanda fuzil 455, 473, 474

ABITL 52

Abdul Hakim 2089

Abdul Hakim Garuda Nusantara 807

Abdul Mansyur 3127

Abdul Rachim 2678

Abdul Rahman 2678, 3125

Abdul Rivai 2660, 2663, 2669

Abdulgani, Ruslan 177, 671

Abdurrahman Wahid. *Lihat* Wahid,
Abdurrahman

Ablai 308, 1149, 1182, 1187, 1191, 1205,
1218, 1227, 1228, 2168, 2169, 2641,
2956, 2981, 2998, 3000, 3028, 3053,
3075, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123,
3348, 3349, 3350

ABRI 174, 183, 214, 226, 228, 230- 231,
234 -237, 240 - 262, 266 - 269, 271,
274, 275, 277 - 282, 295, 304, 308,
309, 354, 357, 359 - 361, 375 - 411,

415, 416, 425 - 429, 431, 432, 438,
439, 442, 854, 883, 884, 888, 892,
893, 897, 901, 903, 904, 906, 907,
916, 925 - 934, 939 - 941, 944, 946,
948, 966, 971, 975, 978 - 979, 981
- 991, 999 - 1002, 1007, 1012, 1020
- 1042, 1050, 1051, 1055 - 1061,
1065, 1069 - 1070, 1076 - 1077,
1080, 1085, 1097, 1099, 1101, 1104,
1110, 1114, 1118, 1121 - 1123,
1126, 1128, 1134, 1144, 1145, 1148,
1151, 1152, 1155, 1156, 1158, 1159,
1169, 1235, 1238, 1240, 1242, 1244,
1246 - 1249, 1251, 1904 - 1927,
1931, 1934 - 1939, 1942, 1945,
1947 - 1949, 1951, 1953, 1954,
1956, 1960 - 1967, 2134 - 2138,
2140 - 2145, 2148 - 2155, 2161,
2190 - 2194, 2198 - 2209, 2212,
2213, 2218, 2221, 2231 - 2234,
2240, 2244, 2250, 2258, 2266, 2292,
2293, 2295, 2298, 2299, 2302,
2306, 2321, 2327, 2329 - 2331,
2333, 2337, 2343, 2344, 2346, 2348
- 2351, 2358, 2361 - 2363, 2370,
2372, 2374, 2376, 2380, 2382, 2386,
2400, 2414, 2421, 2526, 2536, 2540,
2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546,
2560, 2561, 2572, 2573, 2576, 2599,
2607, 2621, 2623, 2635, 2641, 2644,
2653

Manunggal KB 2483

dan Dwifungsi 380, 2460

dan Tim Alfa 403, 415, 421, 1184,
1186, 1190, 1203, 1226, 2311,
2366, 2956, 2981, 3016, 3040,
3047, 3076, 3102, 3103, 3104,
3105, 3106, 3187, 3188, 3189,
3342, 3343, 3344

dan Tim Asahan 403

dan Tim Lorico 1089

dan Tim Makikit 1103, 1168

dan Tim Morok 403
dan Tim Nuklir 402, 970, 972, 973,
1243
dan Tim Pancasila 1168, 1181,
1184, 1191, 1192, 1225, 1930
dan Tim Saka 415, 419, 953, 1149,
1218, 2298, 2311, 2956, 2957,
3016, 3076
dan Tim Sasurut 1191
dan Tim Sera 403, 415
dan Tim Sukarelawan 958
dan Tim Susi 207, 214, 226, 400,
416, 883, 884
dan Tim Tuti 883
dan Tim Umi 883
Lihat juga ABRI/TNI, militer
Indonesia, TNI
ABRI/TNI 2526, 2536, 2540, 2541,
2544, 2574, 2576, 2585, 2586, 2587,
2588, 2589, 2590, 2591, 2609
ACET 800
ACFOA 44, 209, 213, 256, 342, 350,
363, 364, 742, 779, 784, 786, 794,
805, 830, 2051, 2053
Action for World Development 255
Achmad Mas Agus 1167, 2669, 3330
Achmad Syamsuddin 3330
Achmad Yahya 2666
acolhimento 20, 48, 51, 2771, 2772,
2773, 2775, 2776, 2777, 2820, 2905,
2911
ACTU 780
Adão, Manuel 2336
Adam Malik. *Lihat* Malik, Adam.
Adi Mulyono 2669

Adios Salova 2678

Aditla 172

Aditjondro, George 805, 809, 810, 812

Administrator Apostolik 740, 742, 743,
744

Administrator Transisi *Lihat* de Mello,
Sérgio Vieira

Adolfo, António 3337

Adu, Julius 3314

Aeri Harapan 806

AETA 780, 799

Afaat, Jose 3346

AFFET 799

Afonso, Martinho 3319

Agama, Henrike 3008

agresi 129

Agus Suharyanto 2673

Agus Suwarno 3337

Agus Tarmidzi 2642

Agus Tarmizi 2964

Agus Yuli 3337

AHI 2170, 2227, 2384, 2956, 3068,
3069, 3070, 3026, 3069

Ahmad Mas Agus 2999, 3086, 3087,
3166, 3169, 3087

AIETD 302, 310, 497, 695, 734, 770

Aileu Hametin Integrasi. *Lihat* AHI

Ainaro 29

Aitana, Gerakan 1056. *Lihat juga*
Operasi Keamanan

Aitarak 313, 321, 324, 327, 332, 1168,
1174, 1179, 1180, 1184, 1186, 1188,
1194, 1209, 1211, 1214 - 1216,
1224, 1248, 1249, 1278, 1931, 2183,
2298, 2317, 2350, 2547, 2548, 2636
- 2638, 2641 - 2643, 2646, 2693,
2955 - 2957, 2960, 2962, 2976,
2981, 2993, 2997, 3003, 3017, 3019,
3023, 3026, 3028, 3029, 3035, 3038,
3040, 3043, 3054, 3062, 3064 -
3066, 3069, 3070, 3076, 3086, 3090
- 3092, 3065, 3066, 3086, 3090,
3092, 3093, 3098, 3127, 3335 -
3339, 3093, 3095, 3097, 3098, 3107,
3113, 3121, 3139, 3140 - 3142,
3145, 3161

Aitahan Matak 486, 505, 507, 508,
1987, 1994, 1997, 2000, 2001, 2002

aksi lompat pagar 298, 299

Aku Berjuang Laksanakan Amanat
Integrasi. *Lihat* ABLAI

Aku Hidup untuk Integrasi 1168

Aku Rela Mati untuk Indonesia. *Lihat*
ARMUI

Aktivisme melawan Kekerasan
terhadap Perempuan 2877

Alaguia, Domingos 3315

Al Anshar 2408

Alap-Alap 403

Alatas, Ali 291, 305, 310, 311, 312, 314,
329, 677, 678, 688, 696, 734, 768,
785, 1986, 2002, 2008, 2654, 2945,
2988, 3050, 3207, 3210, 2945, 3050,
3201

Ala Uni 3354

Albrecht, Carolus 1203, 2975, 3095

Albright, Madeleine 729

Aleixo, José 3070

Ali Moertopo 673,684, 2580, 2662

Aldeia, Alves 169, 170, 663

Aldrich, George H. 675

Alegria, Petrus Kanisius 2391, 2398,
2399

Alex, David 268, 276

Alfa 415

Alfaro, Julio 54

Ali Moertopo 178, 191, 194, 195, 197,
201, 224, 384, 387

Ali Musa 887, 948

Aileu Hametin Integrasi. *Lihat* AHI

Alkatiri, Mari 64,171, 181, 184, 211,
218, 223, 345, 346, 347, 349, 350,
352, 355, 471, 483, 486, 499, 753,
754, 755, 760, 764, 765, 813, 857,
858, 859, 883, 918, 923,1957, 2597,
2801

All-Inclusive Intra-East Timorese
Dialogue 14

Almeida, Marçal de 412

Aloysius Rani 1107, 1125, 1126, 1131,
1138, 1141, 1142, 1272

Alves, Alfredo 408, 443, 2296, 2303,
2306, 2308, 2375, 2391, 2396, 2410,
2411

Alves, Domingos 3333

Alves, Domingos Maria. *Lihat* Ambulan

Alves, Hermenegildo 203, 459, 460,
2331

Alves, Jacinto das Neves Raimundo
22 - 26, 455, 460, 461, 471, 481,
482,487, 509, 1108, 1109, 1120,

1131, 1145, 1256, 1998, 2016, 2017,
2019, 2024, 2029, 2031, 2034, 2037

Alves, João Baptista Fernandes 499

Alves, Leonardo 1033

Alves, Maria Olandina Isabel Caeiro 23,
24, 25, 774

Alves, Merita 944, 946, 948, 1259

Alves, Paulo 510

Amahorseja, Hendrik 788, 806

Amaral, Adolfo 3312

Amaral, Carlos 3109, 3134, 3346

Amaral, Clementino 238, 351, 353, 355

Amaral, Cosmos 1210, 3327

Amaral, Francisco João 61

Amaral, Francisco Xavier do 171, 181,
182, 209, 213, 216 - 219, 237, 241,
244, 245, 343, 347 - 356, 470, 471,
473, 477 - 479, 483, 858, 863, 870,
877, 882, 919, 920, 924, 937, 1005,
1013 - 1017, 1020, 1021, 1027,
1033, 1237, 1957, 1959, 2606, 2617,
2801

Amaral, João Francisco 23

Amaral, Leão P dos Reis. 499, 2089

Amaral, Moises do 752, 765

Amaral, Olga 2085, 2089, 2092, 2098

Amaral, Xavier do 721, 753

Amati, Domingos 3336, 3339

Ambulan 1017, 1018

AMD 437

Amerika Serikat 10, 44, 45, 172, 174,
193, 199, 222, 224, 225, 228, 241,
243, 244, 248, 252, 256, 261, 280,

314, 319, 328, 337, 358, 359, 361 -
363, 1989, 2006, 2078, 2079, 2564,
2566, 2580, 2629 - 2632, 2655,
2864, 2865, 2916, 2940, 2943, 2980,
3012, 3015, 3088, 3209, 3210, 3211
- 3214, 3219, 2943, 3210, 3219
Kongres 659, 725, 752, 779

Amien Rais 305, 811

Amirul Isaeni 395, 2954

Amnesty International 38, 287, 365,
891, 894, 1097, 1134 - 1136, 1189,
1986, 1987, 1988, 1995, 1996, 2000,
2002, 2007 - 2009, 2012, 2018,
2019, 2022, 2038, 2052, 2053, 2061,
2069, 2072, 2082 - 2083, 3257,
3261, 3262, 3264

An-Nur 2402

Anderson, Benedict 793

Anderson, Russell 1108

Andrade, Antonio 2668

Andrade, Filomeno 499

Andrade, Nazario José Tilman de 3000,
3119, 3121

Andreas Prawin 3127, 3355

Andreas Sugianto 2964

Andrews, David 313, 3027, 3144

angka kematian kasar 547

Angkatan Bersenjata 2877, 2888, 2889,
2901

Angkatan Pertahanan Timor-Leste.
Lihat FDTL

Angola 168, 177, 218, 222

Anjos, Eduardo dos 915, 967, 990, 1034

Anjos, Virgilio dos 1066, 1072 *Lihat*
juga Ular Rheik

Annan, Kofi 159, 292, 303, 310, 315,
323, 336, 337, 367, 669, 678, 695,
696, 699, 734, 769, 777, 795, 813,
2630 2944, 2947, 2986, 3215

ANP 182

Antonia, Maria 1007, 1008, 1017, 1035

Antunes, Melo 667

Anucaí, Tomás 2331

Anwar, Dewi Fortuna 45

Anyelir, Revolusi 9, 10, 2597, 2625,
2627, 2937

apakabar 800

Apalagi, José 3320

apartidarismo 184, 203, 205, 2886

APEC 298, 331, 336, 337, 716, 734, 802

APCET 798, 804, 809

Apodeti 10, 25, 82, 89, 116, 172, 178
- 183, 188 - 193, 195, 198, 205,
206, 211, 215, 221 - 224, 229, 231,
233, 234, 235, 346, 354, 396, 397,
399 - 403, 424, 426, 427, 433, 442,
751,861 - 864, 874, 879 - 881, 887,
897, 900, 902, 914 - 922, 930, 937,
960, 1005 - 1008, 1051, 1157, 1234
- 1236, 1904, 1941, 1957, 1966,
2121, 2122, 2355, 2368, 2370, 2409,
2528, 2531, 2532, 2533, 2534, 2538,
2539, 2541, 2549, 2598, 2599, 2600,
2601, 2602, 2603, 2605, 2612, 2613,
2620, 2621, 2626, 2636, 2893, 2901,
2938, 2956, 3017, 3043, 3073

Aquino, Pedro 913, 914, 921

Araújo, Abilio 181, 184, 284, 486, 754,
755, 756, 759, 761, 763 - 767

Araújo, Alberto 499

Araújo, Arnaldo de 424

Araújo, Arnaldo dos Reis 172, 234, 237,
239, 425, 426, 445, 2391, 2398,
2399, 2455

Araújo, Basilio 307, 325, 329, 3025,
3063, 3144

Araújo, Fernando de 808, 809, 2500,
2509

Araújo, Guilhermina 486, 754, 765

Araujo, Guilhermino de 3333

Araújo, Jose Bonifacio dos Reis 428

Araújo, Padre Jovito do Rêgo de 23,
24, 64

Araújo, Pedro 3070

Araújo, Rosario de 61

Araújo, Rui 1106

Araújo, Tito Soares de 2132

Archer, Robert 791, 792

Ariate, Manuel 3315

Arifuddin (Brigadir Jenderal) 3060,
3064, 3194, 3197, 3195

Aritonang, John Harlan 1107, 1139
armas brancas 2300, 2333. Lihat juga
Força Auto Defesa

Armed. *Lihat* Artileri Medan

Armstrong, AG 707

Armstrong, Bill 783

Armui Merah Putih 2223, 2226, 2311,
2312, 2315, 2316, 3079, 3081

Armyn Ali 2661

Artawi Sahari 2665

Arte Moris 2809, 2816

Artidjo Alkostar 2020, 2029, 2108

Artileri Medan 927, 928, 954, 990

Aruan, Binsar 1121, 1130, 1137

ASDT 9, 171, 172, 176, 180, 183, 184,
185, 186, 343, 348, 350, 351, 857,
862, 868, 2938

ASEAN 173, 174, 175, 209, 2864

Asep Kuswadi 2668, 3107, 3109, 3111,
3131, 3132, 3133, 3346

Asia Foundation 67

Asia Students Association 799

Asia Watch 793, 1137, 1138, 1141, 1272,
2024, 2060, 2064, 2066, 2067, 2068,
2069, 2071, 2074, 2080, 2404

ASIAT 214

Asmah Achmad 2003

ASIET 800, 809

Asosiasi Mantan Tahanan Politik. *Lihat*
Assepol

Asosiasi Perpustakaan dan Informasi
Timor-Leste. *Lihat* ABITL

Assepol 18, 23, 27, 54, 2709

Assistencia 892, 893, 894, 896, 902, 906,
910

Assistente Comissariado 456

assistente zona 464

Associação de Amizade Portugal-
Timor-Leste 778

Associação Popular Democrática
Timorenses. *Lihat* Apodeti

Associação Social Democrata
Timorenses. *Lihat* ASDT

assuliar. *Lihat auxiliar*

Asvi Warman Adam 44, 158, 229, 342,
352, 353

Ataúro, Pulau 10, 30, 32, 163, 200, 206,
208, 209, 216, 217, 223, 225, 252,
257 - 261, 265, 275, 281, 359, 2324,
2345, 2346, 2419, 2545, 2561, 2562,
2571, 2893, 2903, 2938

Atelulo, Francisco (alias) 3313

Atino Brewok 1112

Atolan, Agustinho 3352

Atusuri, Guilherme 3319

audiensi amnesti 94

audiensi korban 28, 36,41,42, 71

audiensi publik CAVR 31, 34, 37, 41,
53, 84, 89, 94, 170, 201, 203, 205,
235, 342 - 370, 2747, 2793, 2795,
2796, 2797, 2802, 2804, 2806, 2807,
2808, 2818, 2830

tingkat nasional 40 - 45, 54, 60, 63,
158, 185 - 186, 225, 236, 256,
342, 2551, 2556, 2596, 2597,
2655, 2694, 2796, 2800, 2801,
2804, 2808, 2898, 2900, 2910

tentang Konflik Politik Internal
857, 881, 887, 919, 922, 1014

tentang Pembantaian 850, 1001,
1110, 1270

tentang Penentuan Nasib Sendiri
dan Komunitas Internasional 697,
774

tentang Perempuan dan Konflik
2126

Audiensi Rekonsiliasi Komunitas 1931,
1932

audiensi tertutup 84

Auni, Firminio 3354

AusAID 3012

Australia 9, 10, 44, 159, 164, 172, 175,
177, 179, 187, 193, 196 - 201, 206,

209 - 214, 219, 222 - 224, 228, 229,
232, 239, 244, 255, 256, 265, 279,
280, 284, 291, 295, 300, 311, 312,
314, 319, 321, 323, 331, 336, 338,
339, 341, 342, 344, 346, 347, 352,
356, 361, 366, 367, 368, 398, 424,
444, 446, 2442, 2457, 2458, 2462,
2463, 2464, 2477, 2503, 2505, 2506,
2507, 2509, 2527, 2578, 2580, 2596,
2623, 2627, 2628, 2650, 2655, 2694,
2864, 2865, 2905, 2943, 2946, 2954,
2956, 2991, 3012, 3018, 3020, 3023,
3039, 3057, 3060, 3063, 3084, 3095,
3096, 3103, 3162, 3130, 3132, 3145,
3146, 3213, 3186, 3209, 3210, 3211,
3212

Parlemen 45

Australian Broadcasting Commission
795

Australian Catholic Relief 780

Australian Council for Overseas Aid.
Lihat ACFOA

Avebury, Lord 762, 782, 792

Ave Maria, Gereja. *Lihat Suai, Gereja*
auxiliar 469

AWD 783, 784

Azis Hasyam 429

B

Babinsa 260, 270, 359, 361, 381, 391,
405, 409, 443, 971, 1041, 1085,
1096, 1102, 1163, 1184, 1187, 1217,
1228, 2151, 2161, 2193, 2194, 2217,
2220, 2294, 2298, 2299, 2307, 2346,
2375, 2376, 2380, 2746

Babo, Adão Salsinha 3320

Badan Intelijen ABRI. *Lihat* BIA

Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional. *Lihat* BKKBN

BAIS 1113, 2064, 2067, 2070, 2074,
2080, 2964, 2965, 3058, 3060, 3061,
3064, 3067, 3194, 3197

Bakin 172, 178, 179, 192, 207, 221, 376,
673, 2017, 2021, 2032, 2064, 2454

Bakorstanas 1991

Bakti Timur Karya 2459

Balibó 214, 2865, 2939, 3081, 3187

Balibó, Deklarasi 11, 216, 221, 229, 239,
426, 2031, 2077, 2531, 2532, 2599,
2620, 2622, 3140

Balide 22, 51, 71

Ball, Desmond 885

Balsemão, Pinto 668, 761

Bamadhaj, Kamal bin Ahmed 796,
1110, 1112, 1118, 1126, 1133, 1138
- 1140

Bambang Gandhi Baroto 2664

Bambang G. Supriyanto 3322

Bambang Hermanu 2678

Bambang Indra 3148, 3317

Bambang R. Gunadi 2666
Bambang Sukresno 2672
Bambang Sungesti 1167, 3123
Bambang Wiriadi 2669
Bambang Wisnumurty 2662, 3024,
3031, 3037, 3091, 3116, 3124
Bangladesh 256
Bank Dunia 326, 337, 341, 2474, 2479,
2480, 2484, 2647, 2822, 2945, 3056,
3067, 3209, 3214
Bank Pembangunan Daerah. *Lihat*
Bappeda
Banpur 388
Banteng Raiders 2307
BAP. *Lihat* Berita Acara Pemeriksaan
Bappeda 432, 2460
Baptista, Joao de Jesus 55
Baptista, João 3313, 3323
Baptista, Orlando 3313
Barbosa, Carlos Alberto 499
Barbosa, Geraldo 870
Bariak, Saran 3355
Barisan Rakyat Timor Timur 2640,
2647. *Lihat juga* BRTT
Barito Pacific 2404
barlaque 465, 469
Barreto, Abe 497
Barreto, Domingos 2043, 2044, 2047
Barreto, Filomeno 3115
Barreto, Financio 1107

Barreto, Jorge 1107, 1139
Barreto, Marcelino 864
Barreto, Maria 23
Barreto, Lino 3333
Barreto, Pascoela 499
Barreto, Sabino 1996
Barreto, Venancio 1139
Barros, Bernardo 3313
Barros, Celestinho 3313
Barros, Manuel 3171, 3172, 3173
Barros, Xisto 3332
Barry, Robert L. 728
Barwick, Garfield 681, 682
base de apoio 452, 453, 461, 471, 472,
480, 485, 926,969, 970, 1008, 1038,
1906, 1915
basis-data pelanggaran hak asasi
manusia 533, 538
basis data sensus batu nisan 533, 850,
851
Basofi, M 2673
Bassarewan, Hamis 917, 944, 945. *Lihat
juga* Hata
Barreto, Eduardo de Deus 29
Barros, Manuel 1200, 1202
Batalion (*angka miring bercetak tebal
mengacu pada kesatuan batalion*)
141 929
144 1103
202 932, 933, 934, 941,942, 943,
999

303 1107, 1108, 1109, 1121, 1127,
1129, 1130
312 940, 941
315 927, 953, 1077, 1088, 1104,
1105, 1156
321 1061, 1103 2542
328 1104, 1245, 1258, 2545
330 1007
401 929, 1030
403 884, 930, 937
405 932
406 1074
407 1104
412 1099, 1100
501 1090, 1922
502 942, 956
503 937
507 940
509 931
501 281
511 1073, 1104
512 930, 940, 971, 1095
516 1105
641 1079, 1080, 1082, 1087
700 990
713 1105
721 928, 942, 958, 1001, 1002
726 1103
744 401, 406, 931, 1035, 1040,
1055, 1057, 1102, 1107, 1108,
1130, 1148, 1149, 2952, 3008,
3040, 3120
745 339, 401, 929, 935, 953, 957,
959, 968, 970, 971, 972, 973,
974, 1067, 1104, 1169, 1183,
1203, 1204, 1218, 1225, 1226,

1249, 1251, 2952, 2974, 2975,
2982, 2989, 3016, 3078, 3096,
3103, 3104, 3106, 3119, 3176,
3182, 3183, 3184, 3185, 3186,
3187

Lintas Udara 100 991, 1066
Lintas Udara 745 991
Marinir 503 1074
Zipur 5 1060

Batalion Partisan Dili 3008
Batara Indra Group 2459, 2461
Batugade, petisi 207
Baucau 29
BCIET 781
Bedjo Juwono 2668
Belanda 159, 160, 161, 162, 164, 178,
218, 299, 337, 353
Beldasi, José 3313
Belo, Abel da Costa 499
Belo, Joánico Césarío 309, 1168, 2298,
2642, 2643, 2644, 2957, 3035, 3046,
3076, 3077, 3315
Belo, Paulo Assis 505, 510
Belo, Saturnino da Costa 2072, 2073
Belo, Uskup Carlos Felipe Ximenes
(SDB) 22, 165, 273, 278, 281, 282,
286, 287, 292, 294, 301, 302, 306,
307, 311, 322, 332, 333, 336, 341,
696, 738, 744, 790, 801, 1135, 2488,
2637, 2644, 2693, 2941, 2944, 2974,
2977, 3162, 3164
Benó, Lino 3353
Beny Ludji 3335
Bere Dasi, Arlindo 3320

Bere Laka, José 3322

Bere Loco Meo. *Lihat* Jesus, João
Baptista Soares de

Bere Loe, Rui 3321

Bere Malae Laka 485, 486, 487

Bere, Manuel G.L. 3316

Bere, Maternus 3327

Bere Tali, Rue 3322

Berek, Joaquim 3327

Bere Masak, Francisco 3323

Beremali, Marcelino 3314

Beremau, Domingos 3338

Beretus, Antoni 1139

Berita Acara Pemeriksaan 1982, 1990,
1991, 1994, 2018, 2049, 2050, 2059,
2090, 2091, 2103

*Berkala Timor-Leste. Lihat Higashi
Chimoru Tsuchin*

Bescau, António 3335

Besi Merah Putih (BMP) 320, 322, 419,
1149, 1168, 1174, 1175, 1176, 1184,
1211, 1224, 1248, 1929, 1930, 2167,
2168, 2225, 2311 - 2316, 2354,
2547, 2636, 2640, 2641, 2645, 2646,
2725, 2956, 2981, 2996, 3003, 3028,
3037, 3107, 3132, 3133, 3152, 2996,
3335, 3345, 3346, 3347

Bete Aloi. *Lihat* Mali, Domingos

Bife, José. *Lihat* Reis, Jose Manuel dos

Bili Ato, Francisco V 3320

Bili Tael, Agustinho 3321

Bi Lear 944

BIA 417, 420

Binanggal Frits 2664
Binpolda 382, 406, 1072, 1163, 2183,
2195
Bintara Polisi Daerah. *Lihat* Binpolda
Biro Pembebasan Republik Timor 177
Biro Pusat Statistik 258, 273, 361, 535,
645
BKKBN 2483, 2484, 2485
BKR 378
Blair, Dennis 3213
Blasius Manek 3355
BMP. *Lihat* Besi Merah Putih
BNU 208, 213, 217
Boaventura, Dom 9, 163, 2453
Boavida, Agostino Freitas. *Lihat* Sera
Malik
Bobo, Bonafacio 3351, 3352
Bobonaro 10, 29
Bolang, Cheri 1138, 2661
Bolshevik, Revolusi 706
Bonaparte, Mariano 1997, 1998
Bonaparte, Rosa Muki 229
Bondia, Domingos 3336
Bonifacio, Mário 1013, 1018
Borges, Julio 3331
Borges, Justinho 3320
Borges, Alfredo Ferreira 756
BPI 384
Branco, Francisco Miranda 23, 509,
1120, 2011, 2014 - 2018, 2020 -

2023, 2029 - 2035, 2037, 2068,
2079

Branco, João 402

Brasil 164, 186, 213, 218, 319

Brereton, Laurie 689

Break, Alfredo 3334

Brichoq 461

Briere, Elaine 792, 831

Brigada Dinamisadora 463, 464

Brigade Infanteri ke-18 236

Brigade Mobil. *Lihat* Brimob

Brigade Penyelamat Integrasi Timor
Timur 3008

Brimob 297, 313, 320, 326, 382, 385,
394, 2547, 2636, 2652, 2959, 2974,
2980, 2981, 2982, 2993, 3038, 3068,
3078, 3089, 3094, 3099, 3101, 3102,
3111, 3116, 3131, 3132, 3133, 3150,
3151, 3154, 3163, 3170, 3172, 3186,
3198

British Aerospace 715

Brito, Filomeno 3348

Bronco OV-10 240, 247, 249

BRTT 325, 417, 420, 421, 2951, 2962,
2963, 2977, 3022, 3053, 3063, 3073,
3074, 3080, 3099, 3100, 3103, 3105,
3121, 3333, 3344.

Brzezinski, Zbigniew 243, 355

Bubun, Tomas 3351

Budi Atmono 2665

Budi Susilo 1199, 2678, 3079, 3171,
3173, 3322

Budiardjo, Carmel 782, 787, 792, 806

Bulog 257, 382, 3061

bunuh diri ideologis 473

Burgess, Patrick 23, 3180

Bush, George 728

C

CAAT 792

Caeiro, Olandina. *Lihat* Alves, Maria
Olandina Isabel Caeiro

Caetano, Marcello 9, 80, 167, 168

Callaghan, James 711

Calohan. *Lihat* Antobio Lobato

Camara, João Freitas da 2043, 2044,
2046, 2047, 2049 - 2057

camarada 465

Camp David 720

Campinos, Jorgé 194

Canalini, Monsignor 745

Canossian 2809, 2812, 2818, 2824

Canossiana, Susteran 2974

Cansil, Manuel 3324

Caldas, Afonso 3314

Câmara Eclesiástica 3095

Cardoso, Agapito 2043, 2044, 2047,
2056, 2057

Cardoso, José 2165

Cardoso, Leoneto 3331

Cardoso, Luis 497, 3323

Cardoso, Reinaldo 787, 790

Cardoso, Teresinha Maria 29

Cardoso, Tomas 3315

Carlos, Adelino de Palma 169

Carlos, Domingos A 3312

Carlos, Francisco 756

Carlos Soares 3312, 3341

Carmelita, Susteran 2405

Carmo, Albino do 215, 240, 351, 355

Carmo, Fernando do 226

Carmona, Carlos Soares 3341

Carrascalão, João 171, 186, 187, 201,
202, 343, 344, 345, 347, 348, 351,
400, 442, 497, 499, 751, 753, 763,
764, 765, 857, 882, 2596, 2726

Carrascalão, Manuel Viegas 171, 231,
313, 320, 345, 419, 499, 1119, 1149,
1174, 1179, 1180, 1248, 2086, 2636,
2646, 2649, 2694, 2972, 2977, 3027,
3040, 3092, 3107, 3111, 3139, 3140,
3141, 3142, 3143, 3144, 3164

Carrascalão, Mario Viegas 171, 182,
187, 190, 199, 203, 207, 234, 238,
239, 274, 276 - 279, 285, 294,
344 - 351, 355, 358, 392, 424, 425,
427, 437, 441, 442, 444 - 446, 498,
752, 763, 766, 858, 859, 1135, 2008,
2162, 2211, 2213, 2377, 2387, 2391,
2399, 2400, 2409, 2454, 2459, 2488,
2506, 2559, 3140

Carrion, Armindo 3336

Carter Center 319, 3012, 3060, 3092,
3093

Carter, Jimmy 45, 725, 728, 2629

Carvalho, Aleixo de 3115, 3348

Carvalho, Cancio 3024, 3042, 3043,
3072, 3073, 3077

Carvalho, Cancio Lopes de 312, 2152,
2298, 2644, 2957, 3024, 3072, 3165,
3313, 3333

Carvalho, Dinis. *Lihat* Nelo Kadomi
Timor

Carvalho, Domingos dos Santos de
3322

Carvalho, Francisco 2956, 3043

Carvalho, Francisco Lopes 499

Carvalho, Lino de 3318

Carvalho, Mateus de 3090, 3336, 3337

Carvalho, Nemesio Lopes de 3072,
3074, 3313

Carvarinho, Maria do Ceu. *Lihat* Bi
Lear

CAS. *Lihat* Comissão de Apoio e
Solidaridade

Casa de Timor 753

Casaroli, Kardinal Agostino 741,743,
745

Cascol 1009, 1021

Case, Clifford 725

Castro 163

Catholic Relief Services 44, 67, 242,
252, 256, 358, 360, 2564, 2565,
2566

Catry, Jean Pierre 792

Cav, Domingos 3354

Cavadini, Fabio 793

CAVR 6, 8, 21, 27, 28, 29, 36, 37, 44, 45,
52, 53, 55, 57, 64,79, 2128, 2168,
2245, 2271, 2277, 2707, 2711, 2714,
2716, 2717, 2718, 2719, 2722, 2723,
2725, 2733, 2734, 2736, 2742, 2744,
2751, 2753, 2756, 2759, 2761, 2762,
2763

CCF 864, 945, 946, 950

CDPM 778, 789

CDR 504
CDT 189, 198
CEDAW 2877
Ceforpol 463, 471
Celah Timor 291, 300, 665, 685, 689,
2442, 2503, 2578, 2595, 2623, 2628
Celcom 511
CEL/FA 510
CEL/FC 510, 511
Center for Internally Displaced Persons
Service. *Lihat* CIS
Center for Strategic and International
Studies. *Lihat* CSIS
Centro Feto Enclave Oecusse 2824
Cepeda, Antonio 917, 975, 990
Cerita dari Garis Belakang 44
Cernac 486
César Mau Laka 915, 917, 944, 1014
Cezo 511
Ch'en His-lien 701
Ch'iao Kuan-hua 702
Chan, Kenneth 691
Chandraça 1065, 1074, 1096
chefe de suco 2453
Chico Zumalai. *Lihat* Atelulo, Francisco
Chomsky, Noam 787
Christie, Kenneth 733
Christopher, Robin 716
Chirac, Jacques 706
Cidadaun 66

CIDAC 778
CIET 780, 781, 782, 786
Cile 319
CIPM 864
Cina 166, 174, 175, 179, 187, 192, 196,
213, 218, 222, 3042, 3211
Cinta Damai, Yayasan 2406
CISSET 792
Civpol 329, 2947, 2948, 2991, 3005,
3078, 3114, 3119, 3134
clandestina 453, 454, 490
Clark, Roger 788
Clinton, Bill 299, 729, 2629
Cloe, Agostinho 3352
Clubo Municipal 2146, 2149
CNRM 14, 26, 282, 283, 292, 299, 300,
303, 310, 360, 361, 453, 496 - 503,
506 - 511, 765, 766, 767, 768, 769,
771, 2012, 2069, 2320, 2599, 2942
CNRT 8, 14, 17, 18, 21, 22, 68, 73, 303,
306, 307, 310 - 312, 314, 319, 321,
323, 324, 326, 331, 332, 334, 335,
340, 341, 367, 368, 454, 498, 499,
511, 765, 769, 770, 774, 809, 1168,
1170, 1175, 1181, 1182, 1184, 1186,
1188 - 1194, 1200, 1205, 1208,
1209, 1214, 1216, 1217, 1224 -
1229, 1249, 1251, 1928, 1930, 2172,
2173, 2178, 2315, 2316, 2354, 2367,
2384, 2599, 2637, 2701, 2709, 2861,
2863, 2867, 2937, 2942, 2945, 2963,
2975, 2976, 2977, 2983, 3005, 3007,
3009, 3009, 3012, 3013, 3020, 3069,
3070, 3074, 3079, 3082, 3083, 3085,
3088, 3092, 3093, 3094, 3099, 3100,
3105, 3110, 3112, 3124, 3113, 3115,

3117, 3118, 3124, 3126, 3128, 3129,
3130, 3137, 3142, 3147, 3161, 3164,
3166, 3172, 3178, 3179, 3181, 3182,
3189

Cobra, Aleixo 2327

Cocoleu, Alex 3070, 3071

Coelho, Avelino 507

Coelho, Ermelita. *Lihat* Siri Lou
colaborador do estado maior 460

Coli, João 3321, 3323

Colo, Gabriel 3124, 3176, 3177, 3351

Comando da Luta Boru-Quere 1009

Comarca 51 - 55, 63, 71, 864, 900, 910,
922, 946, 947, 1042, 1043, 1044 -
1055, 2345, 2347, 2349, 2350, 2364

Comarca Balide 2897, 2920

Comissão de Apoio e Solidaridade 985

Comissão Política Nacional. *Lihat* CPN.
Lihat juga Comissário Política

Comissário Política 453, 455, 460, 461,
486, 489

Commission for Truth and Friendship.
Lihat CTF

Comité Democrático Revolucionária.
Lihat CDR

Comité Executivo 505, 506, 507, 508,
509, 510

Community Aid Abroad 780, 794, 796,
2464

Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa. *Lihat* CPLP

Companhia de Instrução 864

Comoro 228, 334

Conboy, Ken 885, 1034, 1925, 1948

Conceição, Domingos da 1107, 2617

Conceição, Jose da 276, 486, 492, 499

Conselho Nacional de Resistência
Maubere. *Lihat* CNRM

Conselho Nacional de Resistência
Timorenses. *Lihat* CNRT

Conselho Revolucionário de
Resistência Nacional. *Lihat* CRRN

Conselho Superior da Luta 460
conscientização 470

Convergência Nacionalista. *Lihat*
Konvergensi Nasionalis

Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against
Women. *Lihat* CEDAW

Convention on the Rights of the Child.
Lihat CRC

Cook, Robin 716

Cornelio Gama. *Lihat* Leki Nahak Foho
Rai Boot

Correia, Abilio Mendes 3345

Correia, Agostinho Alves 3346

Correia, Anacoreto 765

Correia, Brigida 23

Correia, Rudolfo Alves 3339

Correia, Reinaldo. *Lihat* Kilik Wae Gae

Correia, Thomas 2085, 2088, 2089,
2091, 2093

Correia Lebre, César. *Lihat* Mau Laka,
Cesar

Corte Real, Duarte Gaspar 1096, 1266,
1269

Cortereal, Adriano 917
Cortereal, Martinho 976, 990
Cortereal, Mateus 976, 990
Cortereal, Nazario 3120
Cortereal, Nazario V. dos S. 3349
Cortereal, Pedro 917, 976, 990
Cosgrove, Peter 331, 339
Costa, Agostinho da 3341
Costa, Amelio da 3343
Costa, Angelino da 3339
Costa, Andre da 2084, 2085
Costa, Antonio da 29
Costa, Antonio Manuel Gomes da.
Lihat Mauhunu
Costa, António Tomás Amaral da. *Lihat*
Aitahan Matak
Costa, Bernardino da. *Lihat* Guterres,
Bernardino Augusto da Costa
Costa, Cecilia da 1023
Costa, Celina Pires da 2085, 2086, 2087,
2089, 2090, 2098
Costa, Cristiano da 1995, 2005
Costa, Cipriano da 3342
Costa, Clementino da 3323
Costa, Domingos da 2013, 2089, 2093,
2099
Costa, Egas da 456, 460, 466, 471, 472,
473
Costa, Filomeno Mesquita da 1167
Costa, Filomeno Misquito da 3123
Costa, Francisco Borja da 181

Costa, Herminio da Silva da 890, 901,
913, 921, 922, 1255, 2962

Costa, Jaime da 29, 3121

Costa, Jaimito Candido da 61

Costa, Januario da 3353, 3354

Costa, João da 2355, 2404, 3341, 3343

Costa, José da 1068, 1102, 1214, 1261,
1267, 3344 *Lihat juga* Mau Hudu
Ran Kadalak

Costa, Julio da 3351

Costa, Ligia da 61

Costa, Lucas da 455, 458, 462, 474, 475,
477, 478, 479, 499, 876, 920, 921,
1014 *Lihat juga* Rama Metan

Costa, Luis da 252, 1009, 1032, 1261

Costa, Manuel Carceres da 236, 238,
246, 354, 355, 356, 357, 360

Costa, Manuel da 3342

Costa, Maria José da 247, 356, 357

Costa, Martinho da 3344

Costa Nunes, Baltazar da 3327

Costa, Orlando da 1147

Costa, Paulo da 3343

Costa, Quiteria da 23

Costa, Thomas da 3344

Costa, Tito da. *Lihat* Lere Anan Timor

Costa, Willem T da 2661, 3015

Costa, Zacarias da 499

Costa Lopes, Dom Martinho da. *Lihat*
Lopes, Dom Martinho da Costa

Covalima 29

Cox, Steve 796

CPCC 324, 368

CPLP 2864, 2866

CPN 8

CRC 2878, 2879

crèche 462, 465

Criado 2084, 2086, 2088, 2090, 2091,
2092, 2093, 2098, 2099

Cribb, Robert 534

crítica-auto crítica. Lihat kritik-
otokritik

Crosland, Anthony 714

CRC 2441, 2442, 2499, 2595

CRRN 14, 269, 272, 277, 283,453, 486,
487, 488, 489, 492, 494, 495, 496,
503, 505, 763, 766, 952, 954, 968,
1004, 1051, 1053, 1055, 1061, 1259,
1260, 1274

CRS 252, 256, 257, 261, 262, 357, 358,
788

Cruz, Filomena Lopes da 1929, 2643,
2981, 3115, 3117

Cruz, Francisco Xavier Lopes da 45,
171, 187, 207, 234, 239, 325, 421,
424, 426, 427, 701, 753, 764, 2647,
2963, 3072, 3115, 3162

Cruz, Humberto Martins da 911, 912,
913, 914, 921, 1957

Cruz, P, Elizario da 3035

Cruz, Vasco da 3332

Cruz, Victor da 3346

CSIS 45, 177, 178, 224, 225, 344, 352,
376, 384, 673, 817

CSRNET 506

CTF 2895

Cuellar, Javier Perez de 287, 288, 694,
744, 761, 762, 2941

Cunningham, Gary 885

Curlog 1926

D

Dadurus Merah Putih (DMP) 322,1149,
1166, 1168, 1172, 1173, 1179, 1185,
1188, 1191, 1200, 1202, 1211, 1212,
1219, 1249, 2166, 2182, 2247, 2312,
2367, 2547, 2637, 2642, 2757, 2834,
2835, 2956, 2981, 2997, 3028, 3039,
3079, 3080, 3081, 3149, 3316, 3318,
3322, 3151, 3323, 3324

Dahlan Effendi 2660

Dalan ba Dame 65, 66

Dalton, Richard 668, 693

Damianus Soetarto 944, 2662

Damião, Domingos 935

Damiri, Adam Rachmat 309, 333, 416,
417, 444,1248, 2639, 2640, 2652,
2654, 2660, 2949, 2952, 2953, 2974,
2999, 3004, 3008, 3010, 3013, 3020,
3021, 3022, 3031, 3036, 3038, 3042,
3049, 3058, 3061, 3062, 3192, 3026,
3062, 3087, 3143, 3162, 3218, 3194,
3195, 3196, 3200, 3202, 3208, 3217,
3218, 3219, 3357

Dana Amanah untuk Timor-Leste 2822

Dana Moneter Internasional. *Lihat* IMF

Dana perwalian 2905, 2917

Danrem 321, 367

Danton Intel 2238

Darah Integrasi 2981, 2997, 3028,
3097, 3098, 3099, 3100, 3179

Darah Merah 1149, 1181, 1189, 1193,
1215, 1225, 3002, 3003, 3097, 3181,
3003, 3097, 3342

Darah Merah Integrasi 2165, 2173,
2174, 2227

Darah Merah Putih 1186, 2165

Dare, Pertemuan 14, 49

Darmawi Chaidir 2661

Darsono 2667

Darurat Militer 2950, 2953, 2954, 2965,
3058, 3194, 3199, 3200, 2952, 3010,
3162, 3199

Daud Napis 2661, 2664

Dauth, John 690

Davidson, Afonso 3324

DDII 2401, 2402

d'Estaing, Giscard 704, 705

Deakin, Hilton 746, 800

Deas, Ansori 2664

Dede Angga Heryanto 2673

DEF 497

Defence Signals Directorate. *Lihat*
DSD

Defert, Gabriel 793

Deklarasi Bangkok 732

deklarasi kemerdekaan 216, 218, 219,
221, 222, 223, 754

Deklarasi Kemerdekaan bagi Negara
dan Bangsa Kolonial 173, 660, 662,
672, 717

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
83, 96, 99, 112, 2441, 2442, 2446,
2571

dekolonisasi 158, 160, 165, 167 - 169,
172, 179, 180, 189, 192, 194, 198,
201, 202, 208, 214, 216, 217, 219,
287, 346, 375, 376, 399

Dekrit No.19/1976 424

Dekrit Presiden No.53 1133

Delegasi Eksternal Fretilin 742, 760,
765

Depnaker 2404, 2405

deponen 33, 37, 47, 70

Demokrasi Terpimpin 379, 380

Dengarlah Suara Kami. *Lihat* Rona Am
nia Lian

Denok Hernandes Internasional
Indonesia, PT 429, 437, 2455,
2457, 2458, 2459

Departemen Luar Negeri 2943, 2987,
3015, 3058, 3059, 3063, 3067, 3219,
2943, 3210

Departemen Orientasi Politik dan
Ideologi. *Lihat* DOPI

Departemento da Orientação Política e
Ideológica. *Lihat* DOPI

Departemen Pekerjaan Umum dan
Transmigrasi 3054

Departemen Penerangan 3058, 3067

Departemen Transmigrasi 3058, 3067

Dephankam 384

desa binaan 258, 2481

desa janda 2218

desa pemukiman 12

despartidarização 454

Detaq, Paul St. L. 2664

Deus, Domingos de 3341

Deus, Mercurious José de 3326

Deus, Simplicio Celestino de 294, 364

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Lihat DDII

Dewan Gereja Dunia 265, 784

Dewan Keamanan 7, 11, 81, 86, 91, 95,
98, 137, 173, 222, 224, 226, 231,
232, 234, 323, 328, 331, 337, 338,
341, 353, 354, 653 - 655, 661, 662,
664, 667, 674, 676, 691 - 694, 697
- 704, 706, 709, 710, 713, 716, 720,
729 - 731, 740, 752, 756, 759, 762,
779, 815, 816, 2523, 2580, 2626,
2630, 2631, 2655, 2864, 2865, 2876,
2895, 2916, 2942, 2947, 2988, 3041,
3207, 3211, 3212, 3214, 3215, 3216,
3217, 3220, 3221, 3211, 3212

Dewan Kehormatan Militer 393, 2011

Dewan Legislatif 167

Dewan Nasional Resistansi Rakyat
Timor. *Lihat CNRT*

Dewan Penasihat CAVR 22

Dewan Perwakilan Rakyat. *Lihat DPR*
RI

Dewan Rakyat 424

Dewan Solidaritas Mahasiswa dan
Pelajar Timor Timur 1182, 1189,
1215

DFSE 496, 497

Dharma Silen 2661

Dharmais, Yayasan 2399

dialog tripartit 292, 302

Dias, João Antonio 1111, 1112

Dias, José Amorim 497, 768

Didit Satrio 2663, 2670

Diet Members Forum on East Timor.

Lihat Forum Anggota Diet tentang
Timor-Leste

Dili 29

Dioses Dili 181, 282, 1054, 1194, 2566

direcção 458

Direktorat Sinyal Pertahanan. *Lihat*
DSD

Divisi Dukungan Korban 55

Divisi Pencarian Kebenaran 55

Djoko Pramono 2660

Djoko Soeharsoyo 3355

Djoko Sukarsono 3125

DMP. *Lihat* Dadurus Merah Putih

Doherty, Edward 787

Doko, Merry S. 2002, 2005

Dolok Seribu, Solapidin 3070

Domi Yos Atok 2029

Domm, Robert 290, 795, 809

DOPI 464, 472, 486

Downer, Alexander 311, 336, 367, 689,
804, 2628

Dowson, Hugh 45, 659

DPR RI 11, 177, 225, 239, 242, 305, 424,
425, 428, 429, 430, 2397, 2950

DPRD 2140, 2151

DRSE 496, 497, 509

DSD 3023, 3024, 3025, 3060

DSMPTT 2978, 3012, 3013, 3074,
3126, 3128, 3129, 3145

Duarte, Dom 163

Dumas, Roland 705

Dunidja 2661

Dunn, Geoffrey C. 659

Dunn, James 177, 179, 209, 342, 343,
344, 349, 353, 356, 662, 701, 752,
758, 780, 783, 792, 2802

Dupe ,Gustaf 805

Dwyer, Kieran 2811

E

- Eanes, António Ramalho 664, 668, 728
- East, Roger 223, 224, 228, 230, 780
- East Timor Action Network. *Lihat*
ETAN
- East Timor International Support
Centre. *Lihat* ETISC
- East Timorese Regional Council 314
- East Timorese Relief Association 2479
- Eda, Satsuki 791
- Edi Sudradjat 2688
- EFTA 168
- El Niño 2463
- El Tari 201, 207
- Eldon, Stewart 716
- Elsam 44, 810
- Emmanuel Messu 2664
- Ena, Carlos 3352
- Ena, Umbertus 3352
- Encarnação, Lucio 763
- Endang Nirwan 2666
- Endar Priyanto 2646, 2663, 2669, 2960,
3040, 3060, 3090, 3091, 3141, 2961,
2986, 3019, 3060, 3219
- Endriartono Sutarto 2688, 2953, 3010,
3197, 3023
- equipa* 462
- Ermera 29
- Eropa, Parlemen 668, 764, 769, 787

esclarecimento 464

Escuteiros. Lihat Pandu Katolik

Espirito Santo, Agustinho 1014

Estado Maior das Falintil 459

estafeta 2221, 2232, 2301, 2319, 2321,
2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2353,
2364, 2416

ETADEP 24

ETSSC 307, 324, 326

ET-Wave 25, 59, 2824, 2825

ETAN 792, 796, 800, 804, 3003, 3219

Etchegaray, Roger 745

ETISC 668, 768, 797, 2240

Evans, Gareth 45, 291, 688, 2943, 2944

Externato de São José 2320, 2323, 2328

F

Fahik, Antonio Alves 29

Falintil 11, 18, 19, 39, 66, 82, 106, 116,
122, 142, 158, 214, 215, 218, 219,
227, 228, 230, 237, 240, 241, 243,
244, 246, 250 - 254, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 271,
272, 274 - 283, 308, 314, 316, 320,
321, 327, 333, 339, 340, 351, 355,
357, 360, 361, 362, 367, 390, 392,
398, 402, 403, 405, 408, 410, 423,
451 - 455, 458 - 462, 464, 466, 473,
475, 476, 477, 478, 480, 482 - 511,
516, 517, 765, 766, 770, 852, 853,
854, 862, 871 - 873, 875 - 880, 884,
885, 887, 889, 892, 898, 911, 913,
914, 918, 922, 926, 927, 928, 930,
931, 933 - 946, 953 - 958, 960, 968,
970, 972 - 975, 978, 981 - 983, 985,
987, 989, 990 - 992, 994 - 1012,
1014, 1016, 1018, 1019, 1022, 1023,
1024, 1025, 1028 - 1041, 1047,
1048, 1051, 1054, 1056 - 1063,
1066, 1073 - 1077, 1080, 1082,
1085, 1089, 1090, 1092, 1093, 1097,
1099, 1101 - 1105, 1122, 1145,
1148, 1149, 1151 - 1165, 1168,
1177, 1183 - 1186, 1191, 1193,
1205, 1211, 1213, 1215, 1219, 1220,
1224, 1229, 1236 - 1240, 1242 -
1246, 1248, 1993, 1997, 1999, 2059,
2064, 2069, 2075, 2094, 2121 -
2123, 2132, 2133, 2135, 2137, 2138,
2140 - 2145, 2148, 2152, 2155,
2157, 2158, 2160, 2161, 2165, 2167,
2188, 2191, 2192, 2198 - 2203,
2210, 2212, 2213, 2221, 2228, 2231
- 2233, 2235, 2239, 2241, 2246,
2250, 2263, 2266, 2270, 2286, 2291
- 2292, 2295, 2298- 2303, 2307,

2308, 2311, 2315, 2318 - 2325,
2329 - 2339, 2343 - 2350, 2353,
2356 - 2363, 2365, 2368, 2370 -
2376, 2380 - 2382, 2415, 2416,
2419, 2421, 2466, 2467, 2470, 2521,
2528, 2529, 2538, 2539, 2542 -
2549, 2552, 2555, 2561, 2562, 2572,
2573, 2575, 2576, 2587, 2593, 2599,
2605 - 2609, 2610, 2613, 2636,
2647, 2709, 2745, 2746, 2747, 2757,
2937, 2940, 2941, 2942, 2945, 2949,
2963, 2976, 2979, 2981, 2983, 2984,
3001, 3042, 3044, 3069, 3070, 3076,
3078, 3082, 3083, 3097, 3100, 3101,
3110, 3113, 3115, 3117, 3082, 3208,
3340, 3341, 3118 - 3120, 3123,
3126, 3128, 3129, 3136, 3137, 3147,
3148, 3179, 3184, 3205

Lihat juga Fretilin, Fretilin/Falintil

Falo Chai 264, 276

Falur. *Lihat* Domingos Raul

Falur Rate Laek 2325

Family Health International 2488

Far Eastern Economic Review 2004,
2005

Farano, Vincenzo 740

Faria, Aviano Antonio 1111

Fatima Cunha, Ana de 29

Fátima, Nossa Senhora de 2323

FDTL 2329, 2331, 2337, 2338

Federer, Ceu Lopes 258, 358

Federer, Juan 768, 800

Feith, Herb 44

Felectil 294, 506

Fereira, Paulus 3149

Fereira, José Cardoso 3317. *Lihat juga*
Mouzinho

Fernandes, Alarico 186, 191, 219, 231,
243, 245, 248, 250, 473, 483, 913,
917, 920, 944, 1018, 3343

Fernandes, Cisto. *Lihat* Helio Espirito
Santo

Fernandes, Filomeno Pedro Cabral
2368

Fernandes, Francisco 790, 1031, 1035,
3322

Fernandes, Gilberto 3343, 3344

Fernandes, Hugo Maria 61

Fernandes, João 3316

Fernandes, Jacob Martins dos Reis 23

Fernandes, John 2484, 2485, 2486,
2487, 2508

Fernandes, Julio 3339, 3340

Fernandes, Martinho 3125, 3126, 3355

Fernandes, Vitalis 3318

Ferrão, Francisco Capella 3120, 3349

Ferreira, Alfredo Borges 499

feto nona 2127, 2187

Fiar Metin Merah Putih. *Lihat* Firmi
Merah Putih

Filipe, Domingos 3315

Filippo, Monsignor Ettore de 741

Financial Times 3186, 3210

Finngeir Hiorth 792

finta 163

Firmi Merah Putih 1166, 2248, 3079

Fitun 1007, 1015, 1108, 1188

Fitzgerald, Stephen 701

FKP 3075, 3076, 3077

Flamboyan, Hotel 954, 958, 2127, 2146,
2148, 2150, 2231, 2232, 2267

Fokupers 44, 59, 64, 2254, 2258, 2276,
2809, 2813, 2824, 2825, 2967, 2968,
2979, 3203, 3257, 3261, 3262, 3264

Fontes, Asiz 3085, 3318, 3319

Forças Popular 2983

Força Auto Defesa 459, 461

Ford, Gerald 2943

Forum Komunikasi Partisan. *Lihat* FKP

Forum Persatuan, Demokrasi, dan
Keadilan. *Lihat* FPKD

Ford, Gerald R. 199, 222, 225, 659, 718
– 723, 727, 2629

Ford, Sir John Archibald 175, 702, 708,
710, 711, 712, 713, 714, 716

Forum Anggota Diet tentang Timor-
Leste 791

Forum Estudante 796

Forsarepetil 307

Forsolidareste 298

Fortilos 298, 350, 369, 809, 832

FPDK 25, 325, 368, 421, 2647, 2745,
2951, 2962, 2963, 2981, 3019, 3053,
3059, 3063, 3064, 3067, 3073, 3074,
3080, 3087, 3099, 3100, 3121, 3136,
3137.
Lihat Forum Persatuan Demokrasi
dan Keadilan

Força Auto-Defesa 2333
Força Defesa de Timor-Leste. Lihat
FDTL
Forças de Sector 2333
Freitas, Adelino 3315
Freitas, Mário 2400
Frente Armada. Lihat Front Bersenjata
Frente Clandestina. Lihat Front
Klandestin
Frente Diplomática. Lihat Front
Diplomatik
Fretilin 2292, 2293, 2295, 2298, 2300,
2301, 2306, 2308, 2319, 2324, 2329,
2330, 2331, 2332, 2333, 2336, 2337,
2339, 2340, 2344, 2345, 2346, 2349,
2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2361,
2368, 2369, 2370, 2371, 2375, 2377,
2379, 2400, 2401, 2404, 2416, 2418,
2419, 2420, 2421, 2422, 2470, 2476,
2503, 2886, 2893, 2901, 2937, 2938,
2939, 2940, 2942, 3001, 3015, 3032,
3121, 3016
Fretilin/Falintil 2359, 2361, 2370, 2374
Fraga, Adolfo 1092, 1102
Fraga, Julião 403
Franca, Jhoni 2165
Fransiskan 160
Francisco Ruas Hornay 2606
Fransiscus Xavierus 2672
Fraser, Malcolm 672, 686, 687, 702, 755
Free East Timor Coalition. *Lihat*
Koalisi Timor-Leste Merdeka
Freeport McMoran 383

Freire, Paulo 213
 Freitas, Adelino 23
 Freitas, Aquiles 458, 475, 476, 2606
 Freitas, Cecilio Caminha 23
 Freney, Denis 761, 780, 781, 793
 Freitas, Aquiles 1959
 Freitas, Inocência da Costa Maria 1111,
 1112
Frente Armada 501, 502, 510, 511
Frente Clandestina 506, 510, 511
Frente Diplomática 510
 Frente Revolucionária de Timor-Leste
 Independente. *Lihat* Fretilin
 Fretilin 10 - 15, 19, 23, 25, 39, 82, 89,
 106, 115, 116, 158, 160, 170, 180 -
 187, 190 - 194, 198, 200 - 238, 240
 - 252, 254, 260 - 263, 265 - 269,
 271, 272, 275 - 277, 280, 282 - 284,
 306, 342 - 345, 347 - 356, 358, 360
 -362, 390, 392, 399, 402, 417, 426,
 427, 438, 451 - 458, 460 - 499, 502,
 503, 506, 507, 511, 657, 664, 667,
 673, 676, 680, 681, 685, 687, 692,
 693, 700 - 702, 708, 712, 721, 722,
 730, 736, 737, 739, 740 - 743, 751
 - 759, 761 - 768, 770 - 771, 774 -
 775, 777 - 786, 789 - 791, 799, 808,
 815, 818, 852 - 881, 884, 887, 889,
 891, 892, 896, 898, 899 - 901, 910
 - 916, 918- 922, 926, 928 - 930,
 933, 935, 936 - 946, 953, 954, 956,
 960, 966, 968, 972, 974, 988 - 1002,
 1005 - 1011, 1014, 1015, 1018,
 1019 - 1034, 1037, 1039, 1042,
 1051, 1056, 1066, 1075, 1076,
 1092, 1101 - 1103, 1122, 1123,

1135, 1151, 1152, 1153, 1156, 1159,
1161, 1171, 1180, 1217, 1218, 1232
- 1238, 1240, 1242, 1243, 1274,
1981, 1986, 1997 - 2000, 2006,
2069, 2075, 2085, 2092, 2094, 2121
- 2123, 2131, 2132, 2138, 2142,
2148, 2152, 2187 - 2189, 2192,
2217, 2230, 2231, 2263, 2270, 2521,
2522, 2525, 2528, 2529, 2530, 2531,
2537- 2539, 2542, 2543, 2549,
2554, 2555, 2560, 2561, 2566, 2573,
2575, 2576, 2597 - 2621, 2626,
2628, 2636, 2639

Fretilin/Falintil 531, 853, 873, 876, 879,
880, 889, 892, 915, 917, 925, 926,
929, 939, 940, 953, 974, 1005, 1006,
1011, 1029, 1032, 1051, 1056, 1058,
1065, 1099, 1104, 1151 - 1158,
1161, 1236, 1238, 1239, 1242, 1246,
1904 -1907, 1910 - 1916, 1923 -
1927, 1934 - 1938, 1944 -1963,
1966, 1967, 2533, 2534, 2536, 2542,
2543, 2546, 2599, 2600, 2607, 2610,
2611, 2612, 2633

Front Bersenjata 2318

Front Diplomatik 2318

Front Klandestin 2318, 2326, 2328

Fry, Ken 779

Fukusawa, Kiyoko 791

Funu Sei Nafatin 270

G

Gadapaksi 309, 411, 415, 417, 2350,
2638, 2640, 2957, 2960, 2961, 3018,
3019, 3069, 3091, 3108, 3120, 3121

Galuh Wandita. *Lihat* Soedjatmoko,
Galuh Wandita

GAM 3025

Gama, Augusto 505

Gama, Carlito 3320

Gama, Jaime 669,696

Gama, Manuel 1164,1177, 1178, 2353,
2981, 3082, 3136, 3137, 3138, 3142

Gama, Paulino. *Lihat* Mauk Moruk

Gama, Vasco da 488, 504, 505, 507

Gamukai. *Lihat* Eduardo Ximenes

Gardapaksi. *Lihat* Gadapaksi

Garnadi, H.R. 2964, 3002, 3006, 3006,
3023

Gatot Purwanto 1137

Gatot Rudianto, Paulus 2661, 2666,
3071, 3073

Gatot Subyaktoro 1195, 2678, 3086,
3087, 3166, 3167, 3330

GCD 533, 538, 539, 541, 544, 545, 547

Gemi Nastiti 809

gencatan senjata 1040, 1061, 1065,
1075, 1076, 1077, 1092, 1093, 1245

Geni *Lihat* Gemi Nastiti

genosida 83, 86, 94, 100, 128, 136, 2522

Gerakan Rekonsiliasi dan Persatuan
Rakyat Timor Timur. *Lihat*
GRPRTT

Gerakan 11 Agustus 858, 862, 866, 871

Gerakan Angkatan Bersenjata. *Lihat*
MFA

Gerakan Anti-Komunis 186

Gerakan Bersenjata 11 Agustus 200,
400, 451, 455, 458, 1904, 2528,
2530, 2598, 2600, 2601, 2613, 2614,
2615, 2617, 2618, 2619

Gerakan Non-Blok 173, 174

Gerakan Pengacau Keamanan. *Lihat*
GPK

Gereja 2863, 2864, 2865, 2866, 2870,
2874, 2877, 2878, 2880, 2885, 2886,
2905.
Lihat juga Katolik, Gereja dan
Protestan, Gereja

Gerhan Lentara, Andi 395, 1107, 1112,
1116, 1118, 1119, 1126, 1140, 2013,
2669

Gerombolan Pengacau Keamanan.
Lihat GPK

Goa 161, 163, 168

Godinho, Joaquim 3338

Goei Hok Gie 806

Goenawan Mohamad 811

Golkar 273, 274, 304, 705

Gomes, Adelino 667, 779

Gomes, António 3335

Gomes, Costa 194

Gomes, Orlando 3101, 3157, 3158

Gomes, Donaciano 507

Gomes, Emiliano Joaquim 3356

Gomes, Francisco da Costa 189
Gomes, Geraldo 29
Gomes, Helena H X 29
Gomes, João 3355
Gomes, Julião 3034, 3151
Gomes, Manuel 3313
Gomes, Marcelo 3314
Gomes, Maria de Fatima 22
Gomes, Sebastião 293, 2327
Goncalves, Domingos 3345, 3346
Gonçalves, Guilherme Maria 172, 182,
183, 238, 239399, 424, 425, 426,
428,
Goncalves, Jacinto 3346
Gonçalves, José 212, 217
Gonçalves, Mário 3147
Gonçalves, Natalino Monteiro 1199,
1200, 3080, 3171, 3323
Gonçalves, Paul 1149
Goncalves, Paulo 3319, 3320
Goncalves, Ruben Monteiro 3318, 3323,
3325
Gonçalves, Tomas 183, 188, 193, 309,
354, 399, 400, 401, 402, 408, 416,
441, 442, 3000, 3020, 3033, 3058,
3098
Gonçalves, Vasco 169, 194
Goodman, Amy 796, 1130
Gorbachev, Mikhail 709
Goronwy-Roberts, Lord 712

Gouveia, Rui Magiolo 202, 203, 211,
664, 874, 912

GPK 1073, 1101, 1122, 1123, 1178,
2199, 2217, 2218, 2299, 2321

Grasiano, Felipe 3346

Graveyard Census Database 3257, 3269

Gray, Gary 718, 829

Greenstock, Jeremy 716

GRPRTT 3141

Guicciardi, Vittorio Winspeare 232,
663, 674, 693, 702, 731,759

Guinea Bissau 168

Gultom, Ery TB 2678, 3097, 3099

Gultom, Hulman 2678, 3090, 3091,
3143, 3340

Gunawan 2669

Guntur 3320, 3321

Guntur Merah Putih 3079, 3081

Gunung Kijang, PT 2459

Gusmão, Albino 918, 949

Gusmão, Gregorio Sebastião 1186

Gusmão, Illidio 3327

Gusmão, Joanico 3327

Gusmão, José Alexandre. *Lihat*
Gusmao, Xanana

Gusmão, Kirsty Sword 798, 831

Gusmão, Xanana 1, 24, 27, 54, 55, 63,
159, 166, 188, 204, 242, 248, 250,
261, 265, 267 - 271, 274 - 276, 278,
282, 283, 290 - 294, 296, 297, 299,
300 - 303, 306, 310, 312, 313, 320,
322, 324, 327, 331, 333, 336, 337,
340 - 344, 346, 348, 350, 353, 355,

356, 357, 359 - 361, 363 - 367, 393,
442, 454, 455, 461, 471, 475, 477,
478, 482 - 499, 507 - 510, 689, 690,
694, 716, 729, 742, 747, 763, 766,
767, 769, 770, 773, 774, 775, 790,
791, 795, 797, 798, 801, 809, 813,
856, 918, 922, 930, 953, 970, 1013,
1021, 1022, 1024, 1025, 1041, 1058,
1089, 1161, 1262, 1951, 1960, 1961,
1983, 1986, 1998, 2050, 2052, 2053,
2059 - 2085, 2092, 2094, 2095,
2109 - 2111, 2318, 2325, 2327,
2328, 2338, 2537, 2599, 2801, 2807,
2813, 2941, 2944, 2945, 2949, 3211,
3221

Gustaf Hero 2999, 3125, 3126, 3129,
3126, 3355

Guterres, Mateus 3339

Guterres, Abel 497, 755, 771 - 774

Guterres, Aparicio 3324, 3325

Guterres, Apolinario 790

Guterres, Antonio Amado de Jesus
Ramos 1014, 1019, 1025

Guterres, Aquelino Fraga 1993, 1995

Guterres, Bernardino Augusto 320, 326,
2993, 3094

Guterres, Caetano 1992, 1998, 2000,
2002, 2005, 2006, 2106

Guterres, Eurico 309, 313, 321, 417,
419, 1929, 2165, 2292, 2298, 2301,
2320, 2350, 2639 - 2642, 2646,
2649, 2693, 2956, 2957, 2962, 2976,
3017, 3018, 3019, 3021, 3023 -
3026, 3030, 3031, 3034, 3035, 3039,
3054, 3061, 3064 - 3066, 3077,
3090, 3091, 3121, 3122, 3123, 3139,
3144, 3161, 3162, 3164, 3196, 3218,
3335, 3336

Guterres, Francisco 268, 360, 361, 1957.

Lihat juga Lu Olo

Guterres, Francisco da Conceição

2309, 2430

Guterres, Isabel Amaral 23, 24, 26, 2813

Gutteres, Januariario 1139

Guterres, José Caetano 61

Guterres, Jose Luis 754, 762

Guterres, Dr. José 2488

Guterres, Olandino 886, 887, 1097,

1099, 1269

Guterres, Vicente 499, 752

Guterres, Virgilio da Silva 463, 2043,

2047, 2055, 2056, 2057, 2109, 2333

Guterres Lopes, Aniceto 23, 24, 65,

2045, 2089, 2090, 2094, 2095, 2096,
2097, 2800

H

Habibie, BJ 45, 303, 304, 305, 306, 311,
312, 331, 336, 386, 395, 396, 415,
511, 678, 680, 689, 690, 696, 698,
699, 706, 734, 751, 801, 802,803,
812, 817, 1929, 1932, 2945, 2946,
2950, 2954, 2956, 2974, 3003, 3023,
3082, 3196, 3199, 3205, 3210, 3213,
2947, 3023, 3196, 3203

hadeer ai-riin 2734

Hadi Santoso 903, 904

Hadisiswoyo, Subagyo 2954, 3010,
3013, 3042, 3061, 3197, 3010

Haing Tjipto Sularsono 2662

HAK, Yayasan 24, 44, 64, 2089, 2095,
2158, 2159, 2312, 2473, 2507, 2632,
2641, 2824, 2825, 2941, 2952, 2953,
2955, 2958, 2960, 2961, 2962, 2964,
2965, 2985, 2986, 2987, 3002, 3006,
3009, 3010, 3012, 3017, 3019, 3023,
3026, 3029, 3146, 3203, 3027, 3029,
3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3040,
3041, 3046, 3047, 3048, 3051, 3056,
3060, 3062, 3063, 3095, 3108, 3115,
3116, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143,
3144, 3157, 3161, 3165, 3199, 3203

Hak

atas air 83, 101

atas ganti rugi 102

atas hidup 100, 101, 110, 111, 113

atas proses peradilan yang layak
107

ekonomi, sosial, dan budaya 112

Hak Asasi Manusia, Pengadilan 3165,
3192, 3217, 3218

Haksolok 270

Halek, Raul 3331

Halilintar 400, 415, 1149, 1166,
1171,1172, 1173, 1177, 1179, 1188,
1191, 1199, 1215,1219, 1220, 1248,
2311, 2353, 2547, 2636, 2641, 2956,
2981, 2997, 3016, 3028, 3053, 3062,
3072, 3079, 3080, 3081, 3082, 3131,
3136, 3317, 3319, 3320, 3138

Hamengkubuwono IX, Sultan 2399

Hametin Merah Putih 1166, 1172, 1173,
1220, 2174, 3030, 3079, 3081

Handrianus Eddy Sunaryo 1107,1139

Handy Geniadi 3019

Hansip

Hankamrata 409, 2361

Hanoi Lorosae II 315, 332, 2958, 3002,
3009, 3012

Hansip 240, 253, 254, 260, 262, 274,
276, 280, 281, 309, 362, 396, 401,
404 - 407, 409, 415, 443, 851, 932,
934, 935, 937, 938, 939, 941, 942,
945, 950, 951, 954, 955, 957, 958,
959, 963, 964, 969, 970, 972 - 974,
976, 985, 989, 990, 991, 992, 1000,
1001, 1003, 1004, 1030, 1041 -
1044, 1047 - 1049, 1054 - 1057,
1059 - 1062, 1065, 1067, 1069,
1072, 1074 - 1080, 1082, 1083,
1085, 1086, 1089, 1090, 1093, 1096,
1097, 1099, 1103, 1105, 1107, 1151,
1154 - 1159, 1162, 1229, 1230,
1238 - 1245, 1259, 1274, 1912,
1918, 1919, 1921, 1922, 1924 -
1926, 1944, 1945, 1946, 1951, 1954,
1955, 2132, 2136, 2138 - 2142,
2144, 2145, 2148, 2150 - 2152,
2156, 2160, 2163, 2190, 2193, 2194,

2199, 2201, 2204, 2206, 2207, 2217,
2218, 2233, 2234, 2245, 2250, 2266,
2267, 2295, 2298, 2300, 2309, 2310,
2311, 2333, 2343, 2344, 2346, 2361
- 2363, 2376, 2378 - 2380, 2421,
2423, 2467, 2484, 2486, 2533, 2536,
2537, 2538, 2542, 2545, 2558, 2559,
2572, 2573, 2607 - 2609, 2621,
2622, 2624, 2638, 2641, 3016 -
3018, 3027, 3028, 3073

Hardiono Saroso 2662, 2665

Hardoputranto SJ 805

Hari Antikorupsi Internasional 2885

Hari Mulyono 2661

Hari Nere 485

Hari Saryono 2665

Hariwibowo, J. 427, 428

Harkito 2666

Harimau Merah Putih 3079, 3081

Harmoko 304

Harriman 682

Hart, Gary 725

Hartono 2663

Haryadi Sutanto 2670

Harun Tateny 3330

Hashimoto, Ryutaro 734

Hata 456

Hati, Yayasan 2406, 2407

Hawke, Bob 688, 780

Heiho 377

Helio Espírito Santo 2337

Hendropriyono, A.M. 402, 2654, 2675,
2688, 2954, 3025, 3058, 3194, 3198,
3195

Henricus Harjatmo 2664

Henriques, Jerónimo 499

Henrique, José 976, 990

Hercules 2399, 2400

Heri Subagio 2669

Herman Sedyono 1167, 1196, 1282,
3040, 3086, 3087, 3088, 3166, 3167,
3086, 3087, 3088, 3089, 3165, 3166,
3167, 3330

Hermanu (Letnan Kolonel Pol.) 3068

Hery Mutholib 2667

Heu, Antonio 1013, 1019

Hornay, Francisco Ruas 244, 476, 1011,
1012, 1237

Hibberd, Rob 793

Hidayatullah 2402

Hidup Baru 808

Higashi Chimoru Tsuchin 787

Hill, Helen 782

Hires, Chip 3184

Hobart East Timor Committee 793

Holbrooke, Richard 726

Howard, John 311, 337, 678, 690, 812,
2946, 3210, 3213

HPPMAI 505

HRDAG 3255, 3267, 3274

HRVD 533, 538, 539, 540, 541,
544, 550. *Lihat juga* Basis-data
pelanggaran hak asasi manusia

Huang Hua 701, 758

hukum hak asasi manusia internasional
2519, 2543, 2610, 2619, 2624

hukum humaniter 2519, 2523, 2543,
2560, 2570, 2583, 2585, 2587, 2592,
2594, 2610, 2611, 2619, 2620, 2624

hukum kebiasaan 91, 95, 97, 99, 102,
104, 106, 117, 118, 121, 122, 127,
130, 131, 142

hukum kebiasaan internasional 82, 83,
84, 92, 97, 100, 102, 109, 110, 114,
116, 117, 119, 120, 128, 2519, 2520,
2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2593,
2611, 2624

hukum kebiasaan perang 83, 117, 118,
120, 122, 123, 124, 127, 128, 130,
131

Humphrey, Hubert 725

Hull, Geoffrey 800

Hull, Terence 535, 645

Human Rights Advocates 794

Human Rights Data Analysis Group.
Lihat HRDAG

Hutajulu, Hisar Richard 3076, 3075,
3077, 3315

HRDAG 42, 43, 67

HRVD 37

Hyland, Tom 797

I

IAPC 810

ICCPR 1984, 1985, 2025

ICESCR 2595, 2692. *Lihat juga*
Kovenan Internasional tentang
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

ICIET 415

ICRC 2561, 2564, 2565, 2598, 2637,
3162

ICJ 2023, 2037, 2038, 2060, 2066, 2069,
2074, 2076

ICRC 26, 204, 211, 212, 213, 214, 223,
231, 252, 256, 257, 258, 261, 262,
272, 281, 308, 332, 349, 350, 788,
855, 922, 1092, 1194, 1248, 1993,
2061, 2067, 2447, 2463, 2505

ICTJ 21, 67, 69

ICTY 3191, 3193

IDP. *Lihat* pengungsi dalam negeri

IFET 319, 793, 800, 804

Igerja Protestante Timor-Leste. *Lihat*
IPTL

IGGI 714, 732

IKADIN 2020, 2021, 2022, 2055

IMF 304, 337, 341, 2945, 3209

Imparsial 22

Impettu 285, 297, 299, 307, 411, 506

impunitas 375 – 377, 404, 2528, 2538,
2540, 2546, 2552, 2555, 2559, 2573,
2583, 2584, 2705, 2862, 2881, 2887,
2891, 2892, 2894

Imaculada, Aquilina 2321, 2324, 2326

Immaculata Mardani 805

imunitas 93

Inacio, Juvenal 219. *Lihat juga* Sera Key

India 168, 239, 256

Indocina 172, 175

Indocement 2404

Indonesia 158 - 160, 162, 166, 168, 170,
172 - 180, 183 - 187, 189 - 201, 205
- 209, 211, 212, 214 - 219, 221 -
235, 237 - 248, 250, 251, 253 - 263,
265 - 268, 270 - 278, 280 - 308, 310
- 327, 329 - 334, 336 - 344, 346,
350, 352 - 359, 361 - 369

INFID 810, 811

Infien, Luis 3354, 3355

Infight 806, 808

Inggris 162, 164, 175, 195, 214, 244,
336, 337, 351, 398, 2864, 2865,
2916

International Court Tribunal for
Yugoslavia. *Lihat* ICTY

Initiatives for International Dialogue
798

Inside Indonesia 810, 832

Institute for the Healing of Memory
2814

integrasi 171, 172, 177, 178, 180, 183,
190, 192, 194, 195, 196, 198, 205,
207, 216, 221, 222, 229, 233, 234,
238, 239, 289, 291, 307, 312, 313,
314

Interfet 159, 331, 335, 338, 339, 340,
386, 396, 691, 703, 706, 709, 716,
729, 735, 1167, 1169, 1204, 1205,

1213, 1229, 2703, 2866, 2950, 3089,
3114, 3123, 3125, 3176, 3178, 3186,
3174, 3186, 3187, 3204

International Bar Association and the
Law Council of Australia 797

International Center for Transitional
Justice. *Lihat* ICTJ

International Covenant on Civil and
Political Rights. *Lihat* ICCPR

International Organization for
Migration. *Lihat* IOM

International Refugee Council. *Lihat*
IRC

intervensi militer penuh 376. *Lihat juga*
Invasi dan Seroja, Operasi.

invasi 14, 80, 81, 87, 92, 99, 115, 116,
123, 126, 132, 158, 160, 178, 193,
206, 211, 215, 216, 218, 222, 224,
226, 227, 229 - 234, 236, 237, 271,
272, 277, 282 -285, 289, 291, 293,
299

IOM 67, 341, 2809

IPJET 796

IPTL 26

Irak 239, 256

IRC 2388, 2406

Irian Barat 176, 671, 673, 681, 693, 708,
718

Irlandia 313, 318, 319

Irsan Wijaya 2678, 3102

Irwan (LNU) 3315

Irwan Kusnadi 395, 2675, 2955

Isaac, Leandro 499, 2963, 3142, 3164

Ishak Kodijat 1117

Istiyono 2667

Iswanto 2661

IWGIA 786

J

Jacob Djoko Saroso 2670, 3316, 3340,
3343

Jajak Pendapat 13 - 15, 19, 27, 80, 81,
92, 159, 165, 168, 302, 304, 314,
316 - 324, 328, 330 - 333, 336 -
341, 386, 395 - 396, 415 - 418, 421
- 423, 678, 696, 698, 709, 734, 747,
775, 1164, 1165, 1167, 1169, 1170,
1186, 1187, 1189, 1190, 1192, 1195,
1201, 1203, 1205, 1210 - 1212,
1217, 1228, 1240, 1241, 1247, 1249,
1251, 1903, 1907, 1920, 1928, 1930,
1956, 1965, 2132, 2165, 2167, 2168,
2170, 2172, 2174, 2188, 2222, 2225,
2227, 2229, 2247, 2311 - 2316,
2328, 2329, 2335, 2365 - 2367,
2382, 2386, 2405, 2406, 2419, 2471,
2474, 2482, 2486, 2527, 2547, 2572,
2577, 2582, 2596, 2609, 2610, 2624,
2628, 2632, 2635, 2638, 2640, 2643,
2645, 2648, 2650, 2651, 2653, 2654,
2655, 2656, 2657, 2703, 2709, 2757,
2777, 2778, 2798, 2799, 2833, 2834

Jakarta 2 1062, 1063, 1245

Jakarta Jakarta 2067

Jaksa Agung 2011, 2158, 2223, 2704,
2722

Jaksa Agung Timor-Leste untuk
Kejahatan Berat, Wakil 3043, 3105,
3135, 3192, 3193, 3195

Januario, Joaquim 3344

Jaringan Pengamanan Sosial 326

Jepang 160, 164, 175, 239, 256, 257,
284, 377, 378, 398, 3014, 3211

Jesuit Refugee Services (JRS) 26, 2406

Jesus, Afonso de 1110, 1139
Jesus, António de 3323
Jesus, Filomeno Paixão de 458, 459,
460, 467, 479
Jesus, João Baptista Soares de 947, 1014
Jesus, Paulino de 3318
João, Adriano 1914, 1941
Joko Himpuno 971
Joko Irianto 2678, 3107, 3109, 3193
Jolliffe, Jill 780, 788, 885, 1106
JRS. *Lihat* Jesuit Refugee Services
JSMP 64
JSN 168, 170
jumlah kematian 530
Jusfiq Hadjar 806
justiça popular 2604, 2605. *Lihat juga*
Pengadilan Rakyat
Justice System Monitoring Program.
Lihat JSMP
justo correctivo 465, 2604
Juventude 23

K

- Kablaki, Gunung 390, 402
- Kaer Metin Merah Putih 1179, 1220,
2165, 3079, 3081, 3083, 3147, 3317
- Kairupan, Glenny 2964, 2965, 3025,
3030
- Kakuk. *Lihat* dos Anjos, Eduardo
- Kalangi, A.P. 426, 428, 429, 431, 2661
- Kalbuadi, Dading 193, 226, 230, 231,
277, 390, 401, 673, 902, 1981, 2455,
2660, 2662, 2688
- Kaledonia Baru 690
- Kalohan 918, 1039
- Kamar Dagang 2885
- Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi
Manusia. *Lihat* OHCHR
- Kamiso Miran 1167, 3123, 3123
- Kampanye Dialog Timor 299
- kamp pemukiman kembali 253, 853,
926, 971, 1082
- kamp penampungan 254
- Kamra 3016, 3017, 3098, 3150, 3154
- Kanada 256, 319
- kanonikalisasi 3273, 3275
- Kanazawa 730, 731
- Kanindotex 2404
- kantonisasi 2949, 3044, 3179
- Kantor Interim 22
- Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak
Asasi Manusia PBB. *Lihat* OHCHR

Kanusa Bino 917

Karmel, Biara 27

Kasa, Leonardos 3356

Kase, Jeremias 1147

Kasenda, R. 230, 902

Kasospol 383

kasu sala 2911

Katjasungkana, Nugroho 298, 364, 365,
806, 808, 812, 2802

Katolik, Gereja 8, 14, 17, 18, 20, 22, 63,
64, 159, 161, 255, 266, 271, 272,
273, 274, 278, 281, 306, 313, 332,
341, 492, 2158, 2260, 2271, 2564,
2598, 2709, 2717, 2940, 2941, 3011,
3013, 3117, 3118

KB. *Lihat* Keluarga Berencana

keadaan darurat 2955, 2974, 2989,
2990, 3041, 3091, 3095, 3196, 3197,
3199, 3200, 3205, 3206

keadilan koreksi. *Lihat justo correctivo*

Kesejahteraan Islam Nasrullah,
Yayasan. *Lihat* Yakim

Keating, Paul 689

Kehakiman, Departemen 2008

Kejahatan Berat, Panel Khusus 3188

Kejahatan Berat, Unit Penyidikan 86,
87, 400, 415, 416, 2015, 2704, 2713,
2715, 2727, 2739, 2750, 2753, 2759,
2760, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895,
3311, 3312

kejahatan perang 129

Kejahatan terhadap kemanusiaan 89,
128

Kejaksaan Agung 31, 36, 46, 47, 52, 65,
80, 85, 89, 90, 93, 94, 885, 2702,
2705, 2711, 2713, 2714, 2715, 2716,
2718, 2726, 2727, 2730, 2731, 2734,
2736, 2739, 2749, 2750, 2759, 2760,
2762, 2882, 2894

kekerasan pengganti 2130, 2148, 2165,
2172, 2264

Kekerasan seksual 109

kelaparan 12

kelompok fungsional 379

Keluarga Berencana 286, 2483, 2484,
2488, 2504

Keppres No. 107/1999 395

kerja paksa 160, 163, 166, 209, 213

kesalahan identifikasi 90

Kesepakatan Rekonsiliasi Komunitas
(KRK) 2716 - 2718, 2724, 2736,
2741, 2751

Kesterven, James 793

Keuskupan Dili 3090, 3095, 3161, 3162

Ketut Suarna, I 2667

Ketut Wardhana 2661

Keri Laran Sabalae 510

KIHESB 2441, 2442, 2443, 2445, 2463,
2475, 2476, 2501, 2507, 2508, 2509

KIHSP. *Lihat* ICCPR

Kilik Wae Gae 270, 272, 475, 485, 486,
487, 488, 492, 493, 494, 1010, 1159

KIN 384

Kinderdorf 2405, 2409

King, Mandy 793

Kiper 812

Kirbiantoro 887

Kissinger, Henry 222, 225, 352, 718,
720, 721, 722, 723, 725, 727,736,
2943

Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
Lihat KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Lihat KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Militer 135

Klandestin, Front 2937, 2941, 3099,
3102

Klibur Oan Timor Aswain. *Lihat KOTA*

KNIL 377

Koalisi LSM 2786, 2788, 2791

Koalisi Timor-Leste Merdeka 791

Kohen, Arnold 694, 727, 737, 787, 788,
790

Kodahankam 236, 388, 389, 390, 410,
431, 440, 441, 445

Kodam 276, 277, 309, 315, 346, 354,
381, 390, 391, 416, 417, 441, 442,
444, 2949, 2951, 2952, 2954, 2955,
2957, 2961, 2999, 3004, 3010, 3011,
3013, 3024, 3042, 3062, 3196, 3197,
2961, 3010, 3062, 3087, 3132

Kodam VIII Brawijaya 2390

Kodim 381, 389, 401, 403, 406, 407,
410, 419, 441, 1630 1070, 2137,
2139, 2141, 2142, 2144, 2145, 2146,
2149, 2152, 2154, 2160, 2162, 2173,
2176, 2177, 2178, 2179, 2181, 2189,
2190, 2192, 2193, 2199, 2200, 2204,

2210, 2212, 2227, 2234, 2235, 2537,
2545, 2547, 2636, 2640, 2641, 2642,
2645, 2646, 2648, 2693, 2891, 2902,
2942, 2946, 2947, 2951, 2952, 2957,
2958, 2959, 2961, 2964, 2965, 2969,
2976, 2986, 2991, 2993, 3002, 3005,
3006, 3011, 3060, 3061, 3062, 3076,
3081, 3083, 3084, 3151, 3182, 3198,
3209, 2951, 2952, 2955, 2985,
3000, 3016, 3026, 3029, 3030, 3031,
3034, 3037, 3046, 3048, 3060, 3062,
3065, 3067, 3068, 3070, 3073, 3075,
3076, 3077, 3080, 3082, 3085, 3087,
3090, 3097, 3100, 3102, 3104, 3111,
3114, 3116, 3119, 3037, 3046, 3081,
3095, 3108, 3109, 3115, 3116, 3119,
3120, 3125, 3127, 3131, 3132, 3133,
3134, 3136, 3137, 3142, 3151, 3152,
3166, 3168, 3173, 3174, 3181, 3182,
3184, 3197, 3205, 3208

Kodim 1633 2982, 3071

Kodim 1635 2982, 3086

Kodim 1636 2982, 3079, 3170

Kodim 1638 2982, 3035, 3037,
3107, 3108, 3109

Kodim 1639 2982, 3123

Kogasgab Seroja 207, 388, 389, 390,
410, 2455

Kohen, Arnold 2802

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia
2315

Kolakops 391, 393, 394, 410, 441, 444,
1107, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125,
1131, 1137, 1138, 1145, 1989, 1990,
2013, 2060

Komandan Peleton Intelijen. *Lihat*
Danton Intel

Komando Pasukan Sandhi Yudha. *Lihat*
Kopassandha

Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. *Lihat* Kopkamtib

Komando Strategi dan Cadangan Angkatan Darat. *Lihat* Kostrad

Komando Taktis. *Lihat* Kotis

komando tempur 380, 385, 391

komando teritorial 380, 385, 389, 394, 406, 428

Kometa, João 3324

Komnas HAM 2963, 3134

Komisaris Nasional 22, 23, 36, 41

Komisaris Regional 28, 29, 33, 36, 47, 56, 57, 58, 59, 61, 69, 70, 93, 2702, 2712, 2715, 2722, 2725, 2726, 2736, 2754, 2755, 2757, 2763

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia 851

Komisi Ahli Hukum Internasional. *Lihat* ICJ

Komisi HAM PBB 1111, 1115

Komisi Ekonomi Eropa 668

Komisi Gabungan Pembela Timor-Leste 298

Komisi Hak Asasi Manusia 100, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 136, 138, 139, 140, 141, 282, 288, 295, 321, 669, 703, 728, 762, 793, 798, 1145, 1247, 2089, 2157, 2641, 2648,

Komisi Katolik untuk Keadilan dan Perdamaian 740, 744, 780

Komisi Kebenaran dan Persahabatan 24, 25, 27, 2896. *Lihat juga* CTF

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Afrika Selatan 82, 94, 136

Komisi Nasional Perempuan 44

Komisi Nasional Perlindungan Anak
2407

Komisi Pemilihan 317, 318, 329, 330,
368, 369, 2993, 3094, 3208

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan
Rekonsiliasi. *Lihat* CAVR

Komisi Penyelidik Internasional 2969,
2971, 3057, 3129, 3142, 3201, 3215,
3221

Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM
Tim-Tim. *Lihat* KPP-HAM

Komisi Penyelidikan 8, 210, 366, 2011,
2035

Komisi Penyidikan 86

Komisi Perdamaian dan Stabilitas.
Lihat KPS

Komisi Rekonsiliasi 8

Komisi Timor untuk Penentuan Nasib
Sendiri 170

Komite Bersama untuk Timor-Leste
2055

Komite Dekolonisasi 2864, 2942

Komite Demokratis Revolusioner. *Lihat*
CDR

Komite Eksekutif 212, 284

Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya 112

Komite Independen Pemantau Suara.
Lihat Kiper

Komite Investigasi 920, 921

Komite Keuskupan Amerika Serikat
273

Komite Khusus PBB untuk
Dekolonisasi 165, 173, 177, 239,
256, 282, 288, 661, 666, 668, 672,
676, 717733, 761, 762, 793, 815

Komite Khusus untuk Pendampingan
Situasi di Timor-Leste 668

Komite Palang Merah Internasional.
Lihat ICRC

Komite Pengarah 18, 20, 22, 46

Komite Regional 212

Komite Reparasi Korban 2824

Komite Sentral 184, 191, 203, 208, 211,
212, 218, 219, 220, 223, 235, 244,
245, 248, 250, 265, 267, 269, 270,
271, 349, 857, 858, 859, 864, 873,
882, 913, 914, 917, 918, 919, 922,
924, 953, 969, 990, 1010, 1011,
1013, 1014, 1015, 1018, 1020, 1021,
1022, 1024, 1033, 1037, 1039, 1042,
1051, 1233, 1237, 1238, 1907, 1957,
1960, 2528, 2604, 2606, 2612, 2613,
2617, 2618, 2619

Komite Solidaritas dan Bantuan. *Lihat*
Comissão de Apoio e Solidaridade

Komnas HAM. *Lihat* Komisi Hak Asasi
Manusia

Komnas Perempuan 2802

Kompi Gabungan 1107, 1121, 1123,
1125, 1126, 1128, 1129, 1131, 1132,
1139, 1142

komunisme 172, 174, 175, 179, 186,
187, 188, 657, 722, 739, 748, 795

Konferensi Reorganisasi Nasional 265,
269, 485, 486, 487, 488

Konferensi Waligereja Indonesia 281,
289, 805, 810

konflik bersenjata 83, 92, 95, 97, 100,
109, 114, 115, 116, 117, 120, 124,
127, 128, 129, 130, 131

konflik internal 27, 39, 42, 64, 158, 160,
165, 170, 185, 187, 201, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 212, 213,
225, 235, 271, 343, 344, 345, 346,
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 356, 360, 361, 362, 856,
2862, 2878, 2910 *Lihat juga* perang
saudara

Kongres Amerika Serikat 45, 243

Kongres Nasional Afrika 497

Kongres Nasional Perempuan 64

Konis Santana 486, 487, 510, 511, 1161

Konkordat 1940 739

Konsili Vatikan II 657, 738, 739, 748

Konstitusi Republik Demokratik
Timor-Leste 22, 220

Kontak Damai 490, 491

Kontras 22

Konvensi Jenewa 2521, 2522, 2526,
2528, 2530, 2570, 2585, 2586, 2587,
2588, 2589, 2590, 2592, 2593, 2594,
2610, 2611, 2612, 2614, 2619, 2624,
2692

Konvensi Den Haag untuk
Perlindungan Warisan Budaya
dalam Situasi Konflik Bersenjata
118, 1983, 2444, 2445, 2501, 2594

Konvensi Hak Anak 2286, 2289, 2291,
2329, 2339, 2373, 2387, 2413, 2417,
2418, 2420, 2424, 2427, 2571, 2591

- Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak 83, 96. *Lihat juga* CRC
- Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial 97
- Konvensi Jenewa 83, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 132, 135, 141, 142, 143, 144, 1909, 1919, 1933, 1934, 1966, 1967, 1983, 1984, 1991, 2125, 2184, 2229
- Konvensi Jenewa IV 2288, 2291, 2386, 2413, 2415, 2418, 2420, 2422, 2424, 2426, 2427, 2428, 2441, 2444, 2445
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia 83, 96, 97, 105, 106
- Konvensi Nasional Bangsa Timor 498
- Konvensi tentang Hak Anak 96, 97, 110, 111
- Konvensi tentang Pelarangan atau Pembatasan Penggunaan Persenjataan Konvensional Tertentu yang Dianggap Dapat Merusak secara Luas 117, 118, 119
- Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun, dan tentang Pemusnahan Senjata Tersebut 118, 119
- Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Kimia, dan tentang Pemusnahannya 119

Konvensi tentang Pelarangan
Penggunaan, Penyimpanan,
Produksi, dan Pengiriman Ranjau
Anti-Personil, dan Pemusnahannya
119

Konvensi tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Rasial 83, 96

Konvensi tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan 83, 96, 97, 110

Konvergensi Nasionalis 495

Kooijmans, Pieter 293, 1106, 1121, 2327

Koopskam 391, 392, 944, 1101

Ko-ops Nusra 2974, 2949, 3199, 3200

Kopasgat 388

Kopassandha 193, 215, 226, 228, 231,
279, 281, 387, 388, 392, 399, 400,
402, 889, 899, 903, 933, 937, 938,
947, 954, 963, 964, 968, 969, 970,
976, 990, 1033, 1041, 1042, 1051,
1052, 1062, 1070, 1083, 1085, 1095,
1100, 1245, 2137, 2148, 2149,
2232, 2298, 2347, 2541 *Lihat juga*
Kopassus, ABRI

Kopassus 250, 280, 295, 308, 309, 328,
340, 346, 349, 351, 352, 353, 354,
355, 357, 359, 361, 362, 393, 394,
395, 398, 403, 410, 411, 416, 418,
420, 421, 422, 427, 440, 442, 444,
885, 1034, 1065, 1073, 1074, 1077,
1079, 1082, 1083, 1088, 1103, 1104,
1112, 1113, 1147, 1163, 1168, 1174,
1185, 1186, 1187, 1226, 1227, 1228,
1246, 1992, 1993, 2014, 2017, 2044,
2061, 2064, 2070, 2080, 2086, 2093,
2134, 2157, 2167, 2232, 2245, 2349,
2350, 2351, 2380, 2381, 2392, 2400,
2544, 2545, 2583, 2639, 2641, 2642,

2643, 2645, 2646, 2647, 2652, 2654,
2939, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957,
2964, 2977, 2982, 2983, 2985, 2989,
2992, 2999, 3014, 3016, 3018, 3019,
3022, 3024, 3025, 3027, 3033, 3035,
3038, 3040, 3046, 3047, 3048, 3049,
3052, 3062, 3063, 3070, 3072, 3073,
3076, 3078, 3080, 3087, 3091, 3103,
3104, 3103, 3109, 3127, 3132, 3195,
3315, 3342, 3343, 3344, 3349, 3355,
3356, 3105, 3106, 3108, 3109, 3111,
3115, 3116, 3117, 3118, 3120, 3121,
3124, 3126, 3127, 3131, 3132, 3164,
3187, 3193, 3194, 3195, 3197

kopi 9, 2459

Kopkamtib 384, 1991

Kopur 388

Koramil 381, 389, 401, 403, 406, 410,
1992, 1993, 2086, 2139, 2140, 2141,
2142, 2144, 2145, 2146, 2149, 2151,
2154, 2156, 2157, 2162, 2165, 2172,
2175, 2189, 2190, 2192, 2193, 2198,
2202, 2203, 2204, 2205, 2209, 2210,
2211, 2212, 2213, 2217, 2224, 2228,
2233, 2234, 2240, 2243, 2257, 2259,
2266, 2267, 2537, 2544, 2545, 2572,
2636, 2645, 2646, 2951, 2952, 2955,
2973, 3037, 3040, 3070, 3081, 3095,
3108, 3110, 3111, 3117, 3120, 3128,
3131, 3134, 3135, 3136, 3138, 3143,
3147, 3148, 3149, 3166, 3171, 3173,
3197

Korea Selatan 239, 256, 318

Korem 381, 389, 391, 392, 393, 394,
401, 404, 409, 410, 416, 417, 418,
419, 420, 441, 442, 2543, 2581,
2636, 2639, 2640, 2645, 2652, 2654,
2656, 2693, 2950, 2951, 2952, 2954,
2955, 2964, 2965, 2996, 3002, 3008,
3009, 3010, 3012, 3013, 3015, 3016,

3024, 3028, 3029, 3030, 3033, 3035,
3037, 3162, 3037, 3039, 3069, 3108,
3115, 3116, 3203, 3041, 3045, 3065,
3091, 3116, 3117, 3124, 3185, 3186,
3197, 3205

KORPRI 2960

Kostrad 226, 228, 231, 235, 236, 247,
249, 333, 338, 354, 357, 386, 388,
391, 392, 394, 395, 412, 424, 441,
898, 899, 1101, 1159, 1223, 2086,
2134, 2157, 2160, 2221, 2261, 2583,
2644, 2953, 2954, 2982, 2990, 3041,
3163, 3164, 3197, 2953, 2955, 3170

Kuntara 2675

KOTA 10, 23, 172, 182, 205, 206, 207,
221, 222, 351, 353, 751, 759, 1904,
2031, 2532, 2599, 2600, 2621, 2622,
2901

Kotis 943, 946, 947, 948, 999, 1001,
1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050, 1057, 1058, 2151

Kouwenberg, Saskia 796

Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik. *Lihat* ICCPR

Kovenan Internasional mengenai Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya 83,
96, 97, 112, 113, 2441, 2577, 2595,
2866, 2867, 2873, 2874

Kovenan Internasional mengenai Hak
Sipil dan Politik 83, 96, 97, 99, 100,
101, 2442, 2446, 2867, 2868

Kovenan Internasional tentang Hak
Sipil dan Politik 101, 102, 103, 106,
107, 113

KPN 295, 1113, 1117, 1119, 1129, 1133,
1134, 1135, 1136, 1137, 1143

KPP-HAM 2876

KPS 314, 315, 320, 321, 340, 2963

Kranek 510, 511

Kraras, Insiden 848

Krieger, Heiki 45, 659

kritik-otokritik 465, 2604

Kronlid, Lotta 799

Kruger, Sam 780

KUD 437

KUHAP 1983, 1984, 1990, 2000, 2007,
2016, 2017, 2018, 2020, 2022, 2023,
2024, 2025, 2026, 2033, 2036, 2046,
2049, 2050, 2051, 2053, 2054, 2056,
2058, 2059, 2062, 2064, 2065, 2067,
2071, 2073, 2075, 2076, 2079, 2080,
2086, 2090, 2091, 2093, 2096, 2098,
2882

KUHP 134, 135, 144, 145, 1125, 1139,
1140, 1981, 1983, 1996, 2000, 2004,
2023, 2051, 2056, 2068, 2092, 2093,
2125, 2289, 2377, 2423, 2567, 2882

KUHPM 1126, 1138, 1139

Kusumaatmaja, Mochtar 45, 256

Kusni Sulang 806

KWI. *Lihat* Konferensi Waligereja
Indonesia

L

Laksaur 2956, 2981, 2997, 2998, 3028,
3040, 3063, 3071, 3086, 3087, 3088,
3089, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169,
3026, 3063, 3064, 3087, 3326, 3327,
3328, 3332

Lalu Manus 3355

Lao, Mateus 3353

La'o Hamutuk 64

Lafaek, Fera 474, 488

Laksaur 1149, 1167, 1168, 1172, 1173,
1180, 1181, 1183, 1190, 1195, 1197,
1198, 1210, 1215, 1223, 1248, 1249,
2167, 2168, 2176, 2178, 2179, 2180,
2181, 2183, 2222, 2261, 2314, 2354,
2383, 2384, 2547, 2548, 2636, 2637,
2641, 2646, 2732

Laline, Konferensi 460, 471, 472, 486,
492, 1015, 1021

Lane, Max 800, 806

Lapsley, Pastor Michael 2813

Lay Kuon Nhen 755

Lasut, Yopie 805, 808

Lau, Anito 3331

Le Compt, M. 703

Leão, Adolfo Viera 3336

Lebre, Pedro Correia 29

Leite, Sabino 2165

Leite, Sabino Goveia 3317

Leki, Gaspar 3312

Leki Nahak Foho Rai Boot 493

Lembaga Advokasi anti-Kekerasan
terhadap Masyarakat Sipil. *Lihat*
Lakmas

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Lihat LIPI

Lembaga Perempuan Oecussi. *Lihat*
Centro Feto Enclave Oecusse

Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat. *Lihat* Elsam

Lemos, Ana Xavier da Conceição 2978,
2979, 3102, 3157, 3179, 3180, 3181
lisan 2776

Lemorai, Yayasan 2402, 2408

Lemos, Adriano Soares 479

Lemos, Carlos 2020, 2036, 2037

Lemos, Pedro 879, 1012, 1042, 1044,
1049, 1051

Lentara, Gerhan. *Lihat* Gerhan Lentara,
Andi

Leo Sukata, Uskup Agung 1054

Lere Anan Timor 458, 471, 476, 485,
486, 487, 496

Leto, Flaviano Dasi 3320

Leto, Marcelino 3319

levantamento 257, 261, 275, 280, 1951,
2188, 2345, 2348, 2381, 2562

levée en masse 1933

lia nain 2706, 2707, 2717, 2730, 2731,
2733, 2734, 2735

Liceu Dr. Francisco Machado 167

Liem Bian Kie 673

Liem Soei Liong 383, 782, 792, 806, 807

Liga Bangsa-Bangsa 716

LilieK Koeshadianto 395, 1167, 2999,
3086, 3087, 3166, 3167, 3330

Lima, Lopes da 161

Linmas 406

Linud 700 1927

LIPI 44

Liquiçá 27, 29, 33, 67, 70

Liquiçá, Gereja 419, 421,2547, 2636,
2640, 2645, 2965, 2966, 2972, 3037,
3038, 3042, 3109, 3111, 3130, 3134,
3135, 3140, 3144, 3187

lisan 2702, 2705, 2706, 2707, 2708,
2710, 2712, 2717, 2718, 2722, 2723,
2724, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732,
2733, 2736, 2741, 2747, 2750, 2756,
2757, 2758, 2761

LSM 2555, 2598, 2632, 2648, 2653

Lumintang, Johny 2661, 2688

liurai 161, 162, 163, 166, 172, 182, 244,
309, 312, 464, 469, 475, 476

Lisabon 9, 11

Lisboa, Antonio 976, 990

LKMD 437, 1096

Lobato, Antobio 1034

Lobato, Domingos 2369

Lobato, Isabel 229, 900, 901, 902, 904

Lobato, Nicolau 171, 181, 186, 218, 220,
242, 245, 248, 250, 390, 461, 469,
473, 483, 484, 485, 753, 760, 785,
900, 914, 917, 918, 919, 920, 922,
940, 1034, 1242, 1958

Lobato, Rogério 184, 203, 204, 211, 220,
223, 270, 345, 346, 348, 350, 459,
486, 860, 864, 922, 925

Lobo, Pieter 1128

Locatelli, Pater Eligio 944, 1009, 2298,
2321

lokakarya partisipatoris 94

Lokakarya Pemulihan 34, 60, 2748,
2772, 2793, 2808, 2809, 2810, 2811,
2819, 2820, 2825, 2826

Lopes, Agustinho 3320

Lopes, Alvaro 3101, 3157, 3158

Lopes, Dom Martinho da Costa 165,
181, 252, 263, 265, 266, 271, 272,
273, 274, 275, 277, 278282, 286,
342, 361, 407, 491, 492, 687, 738,
740, 741, 742, 743, 744, 747, 751,
752, 785, 790, 791, 1054, 1998, 2465

Lopes, Elvis 3351

Lopes, Felismino 3313

Lopes, Fernando 3313

Lopes, Filomeno 403

Lopes, Gilverto 3314

Lopes, Humberto 3318

Lopes, João 2992, 3101, 3157, 3158,
3159

Lopes, Manuel 3320, 3322

Lopes, Martinho 3313

Lopes, Martinho da Costa 2941

Lopes, Dom Martinho da Costa 2865

Lopes, Rui 3089

Lopes, Simão 1167, 1228, 1284, 3124,
3175, 3176, 3350

Lopes, Victor 3347
Lorico 403
Loromunu 3079, 3081
Loto Runggum, Agustinus 2098
Lourdes, Albino 1998, 2002
LPHAM 808
Lu Olo 498, 499, 502, 1957, 2319, 2325
Lubis, Todung Mulya 807
Ludwig, Klemens 786
Luis Metan. *Lihat* Oliveira, Luis da
Costa
Lumintang, Johny 315
Lusitania Expresso 796, 806
Lutan, Ahwil 2065

M

- M. Yusuf 248, 276, 742
- Mabes Polri 2061, 2065
- Madeira, Martinho 1103
- Madeira, Pastor Hilario 3167, 3168
- MacDougall, John 800
- Macey, Dave 781
- Madeira, Hilario 1195, 1203
- Madeira, Jimmy 2816
- Magalhães, António Barbedo de 792,
799, 806
- Magalhães, Manuel 1200
- Maggiolo, Rui Gouveia 2603
- Magna Carta 2861, 2863, 2867
- Magno, Bonafacio 2011, 2015, 2020,
2034, 2036
- Magno, Francisco dos Reis 29
- Mahadomi 419, 2641, 2981, 3028,
3114, 3115, 3116, 3117, 3118
- Mahasiswa Muslim Asal Timor Timur.
Lihat Mamtim
- Mahidi 312, 332, 415, 1167, 1168, 1172,
1180, 1182, 1183, 1185, 1187, 1195,
1197, 1198, 1205, 1206, 1217, 1218,
2152, 2176, 2181, 2183, 2227, 2248,
2298, 2314, 2315, 2354, 2383, 2385,
2641, 2644, 2956, 2957, 2981, 2997,
2998, 3003, 3024, 3028, 3042, 3048,
3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3086,
3088, 3089, 3100, 3131, 3165, 3167,
3008, 3026, 3072, 3093, 3313, 3314,
3332, 3333, 3334

Mahkamah Agung 2008, 2022, 2036,
2042, 2057, 2158

Mahkamah Internasional 8, 97, 99, 120,
160, 162, 300, 653,665, 691, 759

Mahkota, Hotel 1983, 1986, 2085, 2086,
2087, 2091, 2092, 2094, 2096

Maia, Carlos 1193, 1200

Maia, Domingos de Deus 2394, 2396

Maia, Egidio 29

Maia, Manuel 3321

Maia, Mateus 1110, 1126,1138, 1140,
3091

Maia, Monis da 210, 349, 350, 354, 876,
915, 916

Maia, Prudencio 985, 992

Majelis Rakyat Timor-Timur 11, 233,
238, 239, 674, 675, 676, 688, 697,
713,731, 817, 2622, 2939

Manaf, Guruh R 2673

Majelis Umum PBB 11, 98, 143, 165,
170, 178, 224, 225, 232, 233, 234,
239, 256, 279, 287, 288, 342, 348,
364

makar 1981, 1983, 1984, 1986, 1987,
1988, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2010, 2011, 2023, 2031, 2034, 2043,
2068, 2072, 2085, 2092, 2098, 2102

Makarim, Zacky Anwar 318, 328, 416
– 418, 420, 444, 2640, 2642, 2646,
2655, 2691, 2965, 2988, 3003, 3011,
3020, 3022, 3024, 3030, 3031, 3034,
3043, , 3061, 3064, 3088, 3192,
3194, 3195, 3197, 3198, 3010, 3026,
3030, 3143, 3162, 3195, 3202, 3208,
3356, 3200, 3202, 3208, 3218

Makikit 415, 2981, 3016, 3034, 3046,
3076, 3125, 3126, 3128, 3034, 3046

Malaka 160

Malari 384

Malaysia 174, 175, 239, 337, 355

Mali, Alvaro 3322

Mali, Americo 3328

Mali Dao, Luis 3324

Mali, Domingos 3327

Mali, Hendrikus 3327

Malik, Adam 176, 222, 399, 672, 719,
720, 722, 725

Malimeta, Florindo 3338

Malimeta, Mateus 3338

Maman Hermawan 1107

Maman Rahman 2665, 2999, 3068, 3069

Mantim 2402

Manafe, Salmun 3031, 3037

Manatuto 29

Mandala, kampanye militer 673

Mandati. *Lihat* Ximenes, David Dias

Mandela, Nelson 301, 306

Manek, Egidio 3327

Mangunwijaya, Yusuf Bilyarto 811

Mantiri 392, 2660, 2662, 2689

Mansyur, M 2665

Manu, Liberatus 3353

Manuel Bere Lete 3320

Manual e Programa Politicos da Fretilin
185, 464, 468, 469

Manufahi 9, 29

Manulin, Paulo 921

Marcal, Guilhermino 3350

Marçal, Luis 976, 990

Marçal, Virgílio 3075, 3076, 3077

Marcos Tato Mali 3323

Maria Immaculada 1053

Mariano, Armindo Soares 428, 434,
445, 446, 2960

Marinir 193, 226, 227, 231, 247, 249,
251, 262, 351, 353, 355, 356, 357,
359, 1056

Marker, Jamsheed 303, 310, 314,
333,669, 689, 696, 706, 716, 734,
769, 770, 775, 2084, 2085, 2948,
3210, 3210

Marmer, PT 2459

Marpaung, Sodak C. 2678, 3075

Marpaung, Wilmar 1167, 2678, 3123

Martadinata, KRI 720, 724

Martin, Ian 22, 287, 315, 316, 317, 321,
322, 330, 335, 338, 339, 364, 367,
368, 369, 422, 444,698, 2647, 2655,
2693, 2694, 2802

Martin Alau 1126,1139

Martins, Dom Manuel da Silva 745

Martins, Francisco 29, 2173

Martins, Hermenegildo 172

Martins, João 867, 975, 1008

Martins, José 172, 351

Marques, Joni 309, 370, 3188

Martin, Ian 2948, 2963, 3084, 3205,
2950, 2962, 2963, 2964, 2972, 2998,
3011, 3026, 3027, 3034, 3144, 3200,
3202, 3205

Martins, Almeida 3312

Martins, Anastasio 3345

Martins, Juvencio 509

Martins, Leoneto 1174, 1176, 1278,
3107, 3108, 3109, 3111, 3131, 3132,
3133, 3107, 3110, 3112, 3113, 3130,
3132, 3134, 3324, 3345

Martins, Lukas 3342

Marxisme 471, 486, 492,1008

Mary McKillop Institute of East
Timorese Studies 800

Masbuku (Letnan) 3024

Mashuri 222

masyarakat internasional 2862, 2864,
2878, 2883, 2891, 2892, 2896, 2903,
2904, 2916

masyarakat sipil 2863, 2864, 2866,
2869, 2870, 2871, 2876, 2877, 2879,
2880, 2884, 2885, 2888, 2889, 2913,
2917, 2918

Matebian, Gunung 390, 925, 933, 934,
938, 941, 942, 956, 958, 969, 970,
974, 1009, 1022, 1029, 1034, 1037,
1152

Matebian Lian 324

Matos, Francisco 3336, 3339

Matignon, Kesepakatan 311

Matsuno, Akihisa [Aki] 791

Mau Bere, Manuel 3319

Mau Bere, Feliciano 3320

Mau Hodo 340 *Lihat juga* da Costa,
Jose

Mau Hudu Ran Kadalak 485, 486, 487,
491, 496, 506, 507. Mau Laka,
César 456, 475

Mau Kruma. *Lihat* Pina, Helio

Mau Laka, César 218

Mau Lear 251, 473, 483, 484, 944, 945

Maubere, Rusdin 1147

Mau Muti 3322

Mau, Miguel 3327

Maubere, Rusdin 3347

Maubuti, Domingos 3334

Mau Seran. *Lihat* da Silva, Venâncio
Gomes

Maubrani 1010

Mauhu 410, 412

Mauhunu 876

Maubere, Radio 243, 356

Mauhunu 267, 270, 393, 484, 485, 486,
487

Mauk Moruk 270, 272, 485, 486, 487,
492, 493, 494, 918, 1159, 2322

Maukruma 456, 459, 474, 479, 484

Mausiri, Julião 23

Mautersa. *Lihat* Mau Xesta, Antonio
Pinto

McCarthy, John 689

McDonald, Hamish 885

McIntosh, Gordon 779

McKinnon, Don 737
McMahon, William 682
Meda, Petrus Saul 1126, 1138
Médecins Sans Frontières. *Lihat* MSF
Medeiros, Uskup 161
Megawati Sukarnoputri 45, 305, 337
Melky (Sersan Satu) 3102, 3179, 3180,
3181, 3341
Mello, Sérgio Vieira de 18, 22, 23, 28,
331, 341, 699, 885, 2709
Mendes, Domingos 3346
Mendes, Maria Fernanda 29
Mendez, Francisco 3313
Mendonça, Adão 913, 1042, 1051, 1052
Mendonca, Cesar 3332
Mendonca, Domingos 3349
Mendonca, Meta 29
Mendonça, Tobias 1013, 1018
Mendonça, Tomás 3069, 3070
Meneses, João 951, 1010, 1021
Menwa 411
Menzies, RG 681
Mesir 256
Mesquita, Alarico 3339
Metan, Domingos 3115, 3353
Metan, Mateus 3335
Metello, Arnão 170, 189
Metinaro 32
Metro Jaya, Polda 2043, 2044, 2047,
2048, 2049

Meyner, Helen 724

MFA 167, 168, 169, 170, 187, 189, 203,
399, 667, 778

Michael Suwito 1138

Miclat, Gus 798

Miguel, Aparicio 3320

milisi 159, 162, 218, 237, 262, 303, 304,
308, 309, 311, 312, 313, 314, 316,
317, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331,
332, 333, 334, 335, 338, 339, 340,
351, 370

militer Indonesia 158, 207, 211, 214,
215, 222, 226, 229, 232, 233, 236,
242, 246, 249, 251, 252, 254, 256,
257, 258, 259, 260, 263, 266, 270,
274, 276, 281, 293, 295, 297, 303,
316, 319, 531 *Lihat juga* operasi
militer

Miller, John 796

Milsas 401, 406, 407, 1107, 1113, 1126,
1127, 1163, 1187, 1211, 3006

Miplin 504

Missao Paz por Timor 796

Mitterand, Francois 705

MNF 3212, 3213

Mohammad Ma'ruf 2660, 2661, 2689

Mohamad Noer Muiz 3357

Moerdani, Benny 179, 193, 228, 230,
231, 274, 277, 278, 281, 349, 385,
387, 402, 411, 427, 431, 664, 673,
686, 724, 726, 727, 736, 743, 784,
888, 890, 902, 1040, 1245, 2388,
2454, 2580

Moertopo (Jenderal) 385
Moko, Laurentino 3047, 3124
Moko. Lihat Soares, Laurentino
Mondale, Walter 726
Monis, António 3076
Monis, Diogo 1013, 1018, 1021
Monis, Leoneto 3324
Monis, Mateus 3324
Monis, Mauterca 3343
Monjo, John 290, 2042
Monteiro, Longuinhos 65
Montes, Atzis. *Lihat* Fontes, Assis
Morok 2981, 3037, 3114, 3115, 3116,
3117, 3026, 3115
Morreira, Celestino 3315
Morreira, Cosme 3315
Morreira, Florindo 3339
Morreira, Henrique 3346
Morreira, Marito L. 3318, 3324
Morris, Cliff 794
Moruk 3076, 3087, 3117, 3165
Moruk, Olivio Mendonça 1167, 1168,
3087
Mota, Francisco 184, 195
Mota, Justino 171, 181
Mota, Marito 1108
Motael, Gereja 293, 903, 1106, 1246
Moucho, Harold 754, 755
Moustan 2667

Mouzinho 3147, 3148

Mouzinho, César Augusto da Costa
171, 187, 211

Movimento das Forças Armadas. *Lihat*
MFA

Mozambik 163, 168, 169, 181, 198, 218,
222, 754

MPR 225, 277, 304, 311, 314, 322, 341
Ketetapan 1978 699

MSE. *Lihat* multiple systems estimation

MSF 26

Mubyarto (Profesor) 437

Muchdi Purwo Pranyoto 2689

Mudjiono (Kolonel) 2662, 2986, 3042,
3132, 3197

Mufad Santoso 2661

Muhamad Kadir 2664

Muhamad Nur 1184, 2667, 3097, 3099,
3157, 3161, 3341

MUITD 202

Muladi 3011

Muldoon, Robert 720

multiple systems estimation 530, 539,
540

Multi-National Force. *Lihat* MNF

Multiple Systems Estimation 3266, 3296

Mulyadi (Jenderal) 393, 2662

Munir 22

Murdani, Benny. *Lihat* Moerdani,
Benny

Mursanib, Soegiman 1107, 1108, 1121,
1123, 1126, 1131, 1139, 1140

Mursiono 2665

Muspida 325, 381, 428, 433, 3030

Mustafa 2667

Mustari 1994

N

- Nababan, Asmara 805
- Naga Merah 1189, 1192, 1224, 1225,
1229, 3026, 3028, 3097, 3181
- Nahak, Gabriel 3328
- Nahak, Simão 3331
- Nahdlatul Ulama 811
- nahe biti boot* 2706, 2735
- Naipospos, Bonar Tigor (Coki) 809
- Nairn, Alan 796, 1130
- Nakamura, Monica 733, 745, 790, 2802
- Nakroma 270
- Nanang Priadi 2662
- Nanggala 1077, 1085, 1090, 1096, 1102,
1104, 2537, 2955, 3016, 3017
- napalm 1905, 1939, 1941, 1964
- Naro, John 177
- Nascimento, Adriano 3334
- Nascimento, António 763
- Nascimento, Uskup Basilio do 22, 55,
311, 322, 1147, 2365, 2803, 3000,
3076, 3164
- Nasution, Abdul Haris 379, 380
- Nasution, Adnan Buyung 807
- National Aboriginal and Islander Legal
Service 794
- National Security Archive 45
- Natxa, Holy 485
- Naubasa, Herman 3354

Ndiaye, Bacre Waky 809, 1114, 1115,
1118, 1119, 1121, 1123, 1134, 1136,
1137, 1140, 1144, 1141, 1271, 1272

Needham, Andrea 799

Nelo Kadomi Timor 485, 488

Neves, José António 810

Newsom, David 720, 721, 722

New York Times 3212, 3218, 3219

Ngadiman Sumarto Putro 2666

Nicodemus Y.Y 3127, 3128

Nicolau, Julio 918

Ninja 297, 411, 3017, 3018, 3082, 3085,
3172

Nobel, Anugerah 2944

Nobel Perdamaian 159, 292, 301, 302,
306, 366, 669, 696, 734, 745, 761,
769, 792, 795, 801, 813

Noer Muis 328, 2952, 2954, 2990, 3011,
3162, 3163, 3186, 3194, 3195, 3197,
3200, 3202, 3205, 3217, 3008, 3010,
3157, 3161, 3162, 3195, 3208

normalisasi 1981

Non-Blok 657

Nono Musihono 2673

Noor Muis, Mohammad 2649, 2652,
2662

Norman, Marciano 2665

Noronha, Francisco 3317

Nunes, Damião da Costa 3326

Nunes, Jaime da Costa 1190

Nunes, João dos 3324

Nunes, Maria 29

Nur Ismanto 2020, 2029

Nunes, Pedro. *Lihat Keri Laran Sabalae*

Nurep 487, 511

Nurtias, Wilson B. 298

Nyus Rahasia 2955, 3116, 3038, 3072

O

- Obe, Domingos 3350
- OCR 505
- ODIR 510
- Oecussi 26, 29, 30
- Ogaden, Perang 706
- OHCHR 43, 2632, 2692, 2693
- OJECTIL 285, 326, 506, 507, 2069, 2326
- Ojetil 2941, 3012
- OKI 174
- Oliveria, Anigio de 3313
- Oliveira, Domingos de 170,171, 181,
191,201, 221, 343, 344, 345,346,
347, 348, 351, 361, 499, 763, 857,
858, 881
- Oliveira, Luis da Costa 3337
- Ologari Assuwain 487, 493, 494, 918
- ombudsman 2884, 2885, 2887
- OMT 2941, 3102, 3179
- OPJT 238
- OPMT 238,458, 463, 464, 465, 483, 864,
937, 944, 947, 990, 994, 996, 1000,
1003,1007, 1012, 1019, 1055, 1153,
1193,1999, 2131, 2231, 2377
- operasi militer
 - Bedah Marinir 77, 246
 - Cabut 2952, 3009, 3010, 3011
 - Cahaya 241, 248, 250, 252
 - Flamboyan 193, 207, 224, 387, 400,
686

Gempur 407
Keamanan 262, 273, 274, 2294,
2297, 2308, 2309, 2340, 2491
Kikis 259, 261, 262, 263, 265, 359,
407, 854, 1056, 1057, 1152,
1153, 1239, 1244, 1906, 1917,
1925, 1936, 1938, 1942, 1945,
1948, 1949, 1952, 1955, 2297,
2308, 2310, 2363, 2415, 2542,
2574, 2607
Komodo 191, 192, 387, 673, 680
Opsus 179, 207, 344, 384, 387, 673
Pamungkas 1921
Pembersihan 251, 3002, 3003,
3004, 3005, 3097
Persatuan 934, 1040, 1245, 2544
Senyum 392
Seroja 226, 246, 251, 256, 260, 264,
388, 390, 391, 936, 1243, 1914,
1917, 1935, 1938, 1942, 1944,
1946, 1947, 1950, 1961
Sisir 246
Skylight 1935
Tatoli 2952
Watumisa 1101
Wira Dharma 2952, 3002, 3009,
3010, 3012
OPS 2310, 2330
Orde Baru 174, 175, 179, 285, 298, 304,
305, 375, 379, 380, 381, 382, 383,
384, 397, 425, 429, 430, 439, 2443,
2460, 2498, 2938, 2939, 2951. *Lihat
juga* Indonesia
Organisasi Migrasi Internasional. *Lihat*
IOM
Organisasi Rakyat untuk Keamanan.
Lihat OPS

Organisasi Siswa Intra Sekolah. *Lihat*
OSIS

Organização Popular de Segurança.
Lihat OPS

OSIS 2320

Osorio, Abilio 2062

Ote, José Antonio 29

otonomi khusus 159, 304, 305, 306,
310, 311, 312, 314, 317, 318, 325,
330, 2947, 2956, 2964, 2965, 3004,
3006, 3007, 3012, 3051, 3052, 3053,
3057. *Lihat juga* otonomi luas

otonomi luas 415, 2937, 2945, 3003

OSIS 505

Oxfam 788, 796, 2464, 2505, 2509

OV-10 Bronco 1939, 1941, 2940

P

- P3TT, Satgas 318, 2963, 2964
- P4. *Lihat* Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- Pablo Puente, Monsignor 278
- Padre Jovito. *Lihat* de Araújo, (Padre) Jovito do Rêgo
- Pagar Betis 257, 259, 261, 286, 2834, 2835
- Pakpahan, Mochtar 811
- Palácio das Cinzas 2874
- Palang Merah 732, 760, 855, 878, 1110, 1111
- Paulino Gama. *Lihat* Mauk Moruk
- Palang Merah, Komite Internasional 536, 628, 2142, 2239, 2337, 2348, 2447, 2974. *Lihat juga* ICRC
- Palang Merah Indonesia 2564
- Partisan 2531, 2532, 2541, 2599, 2620, 2621
- Pam Swakarsa 321, 326, 419, 2641, 2987, 3028, 3051, 3053, 3060, 3091, 3099
- Pana 3107, 3107
- Pancasila 258, 380, 398, 429, 438
- Pancasila, Tim 3028, 3097
- Pandjaitan, Luhut 2675
- Panjaitan, Sintong 2954
- Pandu Katolik 2320, 2664
- Panel Khusus 2704, 2713, 2752

Panel Seleksi 23

Pangaribuan, Luhut 294, 365, 2020,
2021, 2029, 2056, 2108, 2802

Panggabean, Maraden 183, 388, 2580

Panjaitan, Luhut 403

Panjaitan, Sintong 1137, 2660, 2675

Parada, Antonio Freitas 428

Parlemen Nasional 79, 2880, 2881,
2884, 2886, 2887, 2888, 2889, 2897,
2900, 2919, 2920

Partai Buruh 658, 683, 688, 689, 755

Partai Komunis Indonesia 700, 749,
805, 806

Partai Rakyat Demokratik. *Lihat* PRD

Partai Sosialis 168, 169, 287

Partidjo 2667

Partisan 193, 215, 227, 229, 354, 397,
399, 400, 401, 402, 408, 415, 416,
426, 433, 442, 883, 884, 927, 930,
1056, 1186, 1235, 2330, 3008, 3015,
3075, 3076, 3077, 3086, 3098, 3008

Pasmar 3 953

Pasmar 9 938

Pastor Domingos. *Lihat* Soares,
Domingos (Maubere)

Pasukan Multi-Nasional. *Lihat* MNF

Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) 1166,
1179, 2165, 2350, 2956, 2957, 3000,
3004, 3005, 3029, 3066. *Lihat* PPI

Pasukan Tombak 1033, 1942, 1952,
1953, 1961

Perlawanan Rakyat. *Lihat* Wanra

Paus Paulus VI 740

Paus Yohanes Paulus II 282, 288, 289,
669, 738, 743, 744, 746, 747, 750,
790, 795, 8162042

Pax Christi International 794

Pax Romana 794

PBB 7, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 22, 24, 30,
31, 34, 45, 67, 162, 165, 167, 173,
174, 175, 177, 178, 206, 222, 224,
226, 231, 232, 233, 234, 239, 248,
255, 256, 275, 276, 279, 282, 287,
288, 290, 292, 293, 294, 295, 297,
299, 300, 302, 303, 304, 310, 311,
313, 314, 315, 316, 317, 318, 320,
321, 322, 323, 329, 330, 331, 335,
336, 337, 338, 341, 342, 352, 353,
354, 367, 396, 400, 415, 422, 424,
427, 1928, 1929, 1930, 1966, 1995,
1997, 1998, 2002, 2005, 2024, 2031,
2032, 2035, 2037, 2043, 2044, 2053,
2057, 2061, 2063, 2070, 2075, 2077,
2084, 2085, 2092, 2095, 2097, 2184,
2245, 2446, 2461, 2473, 2499, 2505,
2523, 2531, 2537, 2547, 2584, 2622,
2624, 2625, 2626, 2628, 2630, 2631,
2632, 2635, 2639, 2642, 2643, 2647,
2648, 2650, 2652, 2654, 2657, 2693,
2704, 2750, 2762, 2864, 2865, 2866,
2867, 2871, 2877, 2878, 2880, 2883,
2888, 2889, 2891, 2892, 2893, 2894,
2895, 2902, 2907, 2909, 2916, 2917,
2937, 2941, 2942, 2944, 2945, 2946,
2947, 2948, 2949, 2950, 2956, 2961,
2964, 2972, 2973, 2974, 2979, 2980,
2985, 2986, 2987, 2988, 2991, 2993,
3005, 3013, 3034, 3041, 3047, 3048,
3050, 3073, 3084, 3095, 3106, 3111,
3114, 3128, 3139, 3143, 3149, 3150,
3151, 3152, 3154, 3155, 3158, 3159,
3169, 3180, 2947, 2971, 2996, 3047,
3165, 3201, 3208, 3210, 3212, 3213,

3214, 3215, 3216, 3219, 3185, 3201,
3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212,
3213, 3214, 3215, 3216, 3219, 3220,
3221

Piagam 91, 136, 137, 165, 173,
655, 660, 662, 663, 671, 692,
701, 710, 717

Sekretaris Jenderal 655, 697, 734,
744, 747, 759, 762, 763, 769,
777, 795, 813, 814, 826, 2942,
2946, 3207, 3209, 3211, 2944,
3208

Sidang Umum 654, 655, 661, 662,
663, 669, 670, 671, 674, 677,
681, 687, 688, 691, 692, 701,
703, 704, 705, 706, 710, 713,
714, 724, 728, 731, 759, 760,
761, 762, 777, 793, 814, 815,
816, 818, 819

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal
2948, 3208

PDB 2443, 2449, 2450, 2451, 2452,
2464, 2474

Pearl Harbor 164

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila 2498

Pedro Geger, Francisco 3317

Pekerjaan Umum 3054, 3055, 3067

pelanggaran nonfatal 529, 531, 532,
571, 572, 574, 575, 578, 579, 581,
582, 583, 586, 587, 592, 594, 596,
597, 598, 599, 602, 603, 612, 614,
621, 622, 623, 624, 625, 626, 629,
632

pola temporal 531

pelanggaran pidana berat 93, 94

Pelapor Khusus PBB tentang
Penyiksaan 2327

Pelapor Khusus 2944, 2967, 3034,
3216, 3217, 3221, 3216

Peliung, Syahrial B. P. 2666, 2669, 2675

pelucutan senjata 423

pemalsuan identitas 121, 128

Pemberian Kemerdekaan bagi Negara
dan Bangsa Kolonial 671, 679,
703,706, 729

Pemerintah Indonesia 162, 224, 255,
282, 314, 329, 353

Pemerintah Sementara Timor-Timur
233,234, 671, 674, 731

pemeriksaan 109

pemilihan umum 198, 220, 238, 242,
273, 274, 384, 429

pemindahan 531, 537

penahanan preventif 103

penahanan sewenang-wenang 102, 110,
111, 124

penanaman paksa 163

Pencarian Kebenaran 32, 37
dan Rekonsiliasi Komunitas 80

Pendidikan dan Kebudayaan,
Departemen 3054, 3055, 3065,
3067

penentuan nasib sendiri 11, 165, 169,
170, 171, 176, 194, 196, 197, 198,
199, 201, 218, 221, 224, 232, 233,
239, 255, 282, 287, 288, 292, 293,
294, 296, 298, 300, 303, 304, 306,
310, 311, 314, 653, 654, 655, 659,
660, 661, 662, 663, 664, 665, 666,
668, 669, 670, 671, 672, 674, 675,

676, 677, 678, 679, 680, 681, 682,
684, 688, 689, 690, 691, 692, 695,
699, 701, 703, 704, 705, 706, 708,
709, 712, 713, 714, 716, 717, 721,
723, 728, 729, 731, 733, 735, 738,
739, 741, 743, 744, 745, 746, 748,
750, 751, 752, 754, 756, 757, 759,
761, 764, 766, 770, 772, 774, 776,
778, 779, 782, 784, 786, 787, 788,
790, 791, 793, 795, 796, 800, 801,
803, 804, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 814, 815, 816, 817, 818, 831

Penentuan Pendapat Rakyat. 384, 673,
685, 697,

Penfui 1092

Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia
2753

Pengadilan Hukum Maubere. *Lihat*
Komite Keadilan

Pengadilan Kejahatan Berat 8, 85, 2753

Pengadilan Permanen Rakyat 757, 789,
806

Pengadilan Pidana Internasional untuk
Yugoslavia. *Lihat* ICTY

pengadilan rakyat 466, 467, 881, 917,
1025

pengadilan transisi 17

pengepungan dan pemusnahan 452,
480, 481

penghilangan orang 100, 101

pengungsi dalam negeri 2948, 2969,
2974, 3100, 3110, 3111, 3112, 3126,
3131, 3152, 3153, 3166

Penjara Cipinang 285, 292, 296

Penpada, Alex 1127

Penyantunan Anak Taruna Negara,
Panti. *Lihat* PPATN

penyerangan seksual 109

Penyesuaian Kembali Struktur
Resistansi 283, 495

Pepera. *Lihat* Penentuan Pendapat
Rakyat

perang adil 92

perang *cyber* 801

Perang Dingin 10, 13, 172, 173, 175,
188, 192, 283, 291, 376, 379, 656,
657, 699, 706, 715, 718, 728, 759,
766, 783, 790, 795

Perang Dunia Kedua 160, 162, 164, 165,
180, 257, 378, 398, 656, 660, 680,
691, 692, 706, 712, 716, 732, 733,
779, 794

Perang Rakyat Jangka Panjang 451, 471,
472, 477, 478, 480, 484, 490

perang saudara 10, 14, 91, 92, 116,
133, 160, 173, 184, 190, 324, 326,
333, 338, 400 *Lihat juga* Konflik
Bersenjata Internal

perbudakan seksual 110, 2121, 2122,
2123, 2124, 2125, 2127, 2129, 2138,
2176, 2177, 2178, 2181, 2182, 2184,
2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190,
2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2198,
2199, 2200, 2201, 2204, 2208, 2210,
2216, 2217, 2220, 2221, 2222, 2223,
2224, 2227, 2228, 2229, 2230, 2236,
2240, 2252, 2254, 2255, 2256, 2257,
2258, 2259, 2260, 2261, 2263, 2266,
2268, 2269, 2270, 2271

perdagangan perempuan 110

Peregrina. *Lihat* Imaculada, Aquilina

Pereira, Amaro 2087, 2089, 2099

Pereira, Antonio 1148, 3121.
Pereira, Agio 499, 502, 510, 756, 769,
770
Pereira, Arcanzo 3320
Pereira, Augusto 2060
Pereira, Belchior Francisco Bento
Alves 2302, 2326, 2327, 2350, 2365
Pereira, Daniel 3072, 3074
Pereira, Domingos 3085, 3157, 3172
Pereira, Elias 3324
Pereira, Filomena Barros 29
Pereira, Francisco 3332
Pereira, Ildefonso 29
Pereira, Luisa Teotonio 772, 776, 778,
786, 2802
Pereira, Maria José Franco 54
Pereira, Vicente Rodrigues. *Lihat*
Vicente, José
Perjanjian Internasional mengenai
Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya 653
Perjanjian Internasional mengenai
Hak-hak Sipil dan Politik 653
Permesta 379
Persit 2485
pertahanan keamanan rakyat semesta
3014, 3015
Pertamina 383
Pessoa Pinto, Ana 22, 54, 64, 499, 754,
760
PET 792
PETA 378

Peters, Brian 711, 885, 886, 888
PGI 810
PIDE 166, 181, 399
Pijar 809
Pilger, John 798
Pina, Hélio 914, 1012. *Lihat juga*
Maukruma
Piton 12 1073
Pinto, Antonio. 3337. *Lihat* Kalohan
Pinto, Constancio 289, 364, 497, 505,
507, 509, 723, 768, 2052, 2053,
2069, 2327, 2332
Pinto, Francisco 1073
Pinto, Matias Amari 1008
Pinto, Paula 50
Pinto, Tomas 476
Pinto Leite, Pedro 796
Pires, Emilia 499
Pires, Frederico M 3322
Pires, Lemos 864,
Pires, Mário Lemos 11, 169, 183, 189,
190, 191, 194, 198, 202, 206, 343,
344, 346, 347, 348, 664 – 667, 670,
793, 1904, 2625
Pires, Paulo 752
Pires, Rosalino 3319
PKI 174, 175, 379, 384
Ploughshares for Peace 799
PMI 256, 257
PMLF 486, 489, 491, 492

Pokastim 808

pola mortalitas keseluruhan 534

pola mortalitas teragregasi 534

politik memerintah senjata 474

Polisi Militer 2143, 2148, 2149, 2150,
2158, 2159

Polisi Militer, Laporan I 1107, 1125,
1126, 1132

Polisi Militer, Laporan II 1107, 1126,
1128

Polisi Militer, Laporan III 1107, 1108,
1126, 1139, 1140, 1271

Politik Persatuan Nasional 492, 494,
495, 496

Polisi Republik Indonesia (Polri) 382,
2757, 2758

Polres 2146, 2158

Polri 2947, 2948, 2949, 2951, 2958,
2959, 2963, 2966, 2970, 2971, 2973,
2974, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984,
2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992,
2993, 2994, 2996, 2998, 3001, 3002,
3004, 3005, 3009, 3011, 3012, 3026,
3029, 3038, 3039, 3041, 3044, 3045,
3049, 3068, 3070, 3071, 3073, 3074,
3079, 3081, 3083, 3084, 3085, 3089,
3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095,
3096, 3099, 3101, 3105, 3035, 3041,
3044, 3142, 3198, 3199, 3109, 3111,
3112, 3113, 3114, 3122, 3123, 3124,
3125, 3126, 3128, 3130, 3131, 3133,
3134, 3135, 3142, 3143, 3144, 3150,
3151, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158,
3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165,
3169, 3170, 3171, 3173, 3174, 3175,
3177, 3179, 3180, 3190, 3192, 3195,

3198, 3199, 3200, 3202, 3203, 3204,
3206, 3207, 3208, 3217

Ponco Atmono 2020, 2021, 2036

Ponto, Gerson 2664, 3114, 3116, 3116,
3193

Portugal 44, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
171, 172, 173, 176, 177, 178, 179,
181, 182, 183, 184, 185, 187, 189,
190, 193, 194, 195, 197, 198, 199,
202, 206, 208, 209, 210, 214, 216,
217, 218, 221, 222, 225, 237, 239,
284, 286, 287, 288, 292, 295, 299,
300, 303, 304, 306, 310, 311, 314,
318, 319, 331, 336, 341, 358, 375,
376, 398, 399, 422, 2442, 2444,
2453, 2461, 2463, 2466, 2477, 2521,
2597, 2624, 2625, 2626, 2627, 2631,
2635, 2692, 2861, 2863, 2864, 2866,
2873, 2880, 2897, 2905, 2937,
2938, 2939, 2942, 2945, 2946, 2947,
3214, 3217

Portugal, Misi Parlemen 288

Portuguese Hackers against Indonesia
801

post-traumatic stress disorder 2490

Poto, Felipe 3354

POW 1932

Pátria! Pátria! 219

PPATN 2409, 2410

PPI 2957, 2962, 3000, 3004, 3008,
3019, 3024, 3029, 3031, 3035,
3076, 3090 *Lihat* Pasukan Pejuang
Integrasi

PPKI 378

Prabowo Subianto 279, 393, 411, 427,
2689, 2675, 2957, 3016, 3017, 3076,
3097, 3126

Pramuka 408, 411

Prancis 2864, 2865, 2916

Pranoto Koesoemo, Ign. 2660

PRD 809

PRK 46, 47, 59, 64, 66, 2701, 2702,
2703, 2705, 2711, 2712, 2713, 2714,
2715, 2716, 2717, 2718, 2722, 2725,
2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731,
2732, 2733, 2734, 2736, 2737, 2738,
2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744,
2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750,
2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756,
2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762,
2763, 2705, 2795

Presidium Juventude Loriku Ass'wain
Timor Lorosa'e 324

Princen, HJC 798, 808

prinsip pembedaan 120

Prinsip-prinsip Penuntun PBB tentang
Pengungsian Internal 2868

Prisoners of War. Lihat POW

Priyo Patmonoyogo 2677

Produk Domestik Bruto. *Lihat PDB*

Profil Komunitas 33,1903, 1920, 1931,
1932, 1937, 1946, 1948, 1949, 1951,
1954, 1955, 1968, 1969, 2772, 2794,
2830, 2831, 2832, 2833, 2835, 2836,
2837, 2847

lokakarya 60, 2290, 2293, 2296, 2298,
2300, 2309, 2312, 2333, 2433

program akar-rumput 94

Proklamasi Integrasi 221, 222

Proklamasi Kemerdekaan November
459, 491

Promosi Kesetaraan, Kantor 2878

propriedade estatal 462

Prosedur Rekonsiliasi Komunitas 80,
93, 94

Proses Rekonsiliasi Komunitas 2899,
2900. *Lihat* PRK

Protestan, Gereja 64

Protokol I CCW tentang Fragmen yang
tidak dapat dideteksi 119

Protokol II CCW tentang Pelarangan
atau Pembatasan Penggunaan
Ranjau, Perangkap, dan Alat-alat
lainnya 119

Protokol III CCW tentang Pelarangan
atau Pembatasan Penggunaan
Senjata Pembakar 119

Protokol Jenewa untuk Pelarangan
Penggunaan Gas PENCEKIK,
Beracun, atau yang Lainnya, dan
Peperangan 118, 119

provinsi seberang lautan 165

proxy violence. *Lihat* kekerasan
pengganti

Proyek Pembangunan Regional dan
Daerah 3055, 3056

PRRI 379

PSTT 234, 239, 314, 424, 426, 676

Puente, Monsignor Pablo 741

Punef, Mateus 3353, 3354

Purwadirdja, Adang Ruchiatna 2660,
2687

Purwanto 2661, 2668,

Purwanto 274, 275, 276, 279, 281

Q

Quartel Geral 203, 864, 910, 920, 1009,
2613

Quina, Moises 918

Quintas, Verissimo Dias 2976, 3105

R

- Rachlan Nashidik 809
- Radio Australia 1998
- Radio Maubere 858, 1018
- Radio Timor-Leste 65, 66, 2768
- Radjagukguk, Adolf Sahala 275, 409,
944, 1052, 1243, 2543, 2660, 2661,
2687
- Radjakarina Brahmana 428
- Rakambia, Radio 66
- Rahardi Ramelan 3061
- Rahardjo 2661
- Rahman Zulkarnaen 2643, 2675, 3105,
3344
- Railakan 403, 1127
- Rais, Amien. *Lihat* Amien Rais
- Rajawali 394
- Rakambia, Radio 2798
- Rakyat Terlatih. *Lihat* Ratih
- Rama Metan 474, 477, 499
- Ramahana. *Lihat* Alves, Leonardo
- Ramos-Horta, José 22, 64, 171, 176,
181, 185, 186, 188, 191, 219, 223,
232, 233, 256, 270, 273, 284, 287,
292, 293, 295, 300, 301, 306, 310,
315, 322, 336, 341, 343, 344, 345,
350, 351, 353, 364, 367, 399, 441,
473, 486, 496 - 499, 510, 663, 667
- 687, 693, 696, 697, 701, 704, 708,
709, 712, 725, 727, 730, 734, 743,
745, 753 - 765, 767 - 770, 773, 775,
783, 785, 787, 791 - 794, 798, 801,
809, 813, 2052, 2628, 2801

Rangel, Sebastião Gomes 1106, 1121,
1246

Raper, Mark (SJ) 779, 805

Rate Laek, Falur 63, 511

Ratih 262, 265, 281, 309, 381, 396, 404,
405, 409, 1065, 1066, 1072, 1076,
1082, 1083, 1085, 1088, 1230, 1245,
1918, 1925, 1948, 1951, 2160, 2199,
2295, 2298, 2307, 2311, 2538, 2545,
2624, 2641, 2645, 2648, 2985, 3016,
3017, 3018, 3027, 3028, 3036, 3037,
3047, 3048

Raul, Domingos. *Lihat* Rate Laek, Falur
Reajustamento Estrutural da
Resistência. Lihat Penyesuaian
Struktural Resistansi

Reajustamento Estrutural da Resistência
e Proposta da Paz. Lihat RER

Reagan, Ronald 794

record linkage 3255, 3275, 3278, 3281,
3283, 3286

Rede 23

Rede Feto Timor-Leste 25

Reformasi 303, 305, 309

Rêgo, Alexandrino do 896, 902, 903,
904

Regu, Anton 3344

Regulasi UNTAET 1/1999 96

Regulasi No. 10/2001 22, 23, 31, 38,
49, 73, 79, 90, 136, 137, 141, 2692,
2702, 2711, 2712, 2730, 2754, 2760,
2771, 2774, 2861, 2896, 2907, 2914

Reabilitação Nacional. *Lihat* Renal

Reis, Alarico da Costa 29

Reis, Marito 511, 1995, 1998, 2002,
2003, 2006, 2008, 2009, 2105

Reis, Thomas dos 3348

Reis, Vicente dos 219,1009, 1010. *Lihat juga Sa'he*

rekonsiliasi komunitas
audiensi 28, 33, 60
Kesepakatan 93
pertemuan 34, 56
prosedur 31, 33, 46, 48, 52, 2312

Relatórios da Descolonização de Timor
45, 659

Remembering History in East Timor
1141, 1272

Renal 238, 466, 467, 1008, 1011, 1015,
1018, 1020, 1021, 1024 - 1028,
1037, 1237, 2188, 2356, 2357, 2370,
2529, 2604, 2606

Rencana Damai 292, 299

Rencana Kontinjensi 2952, 3007, 3010,
3011

Rencana Pembangunan Lima Tahun
2448, 2455, 2500

Renetil 24, 25, 285, 294, 297, 298, 299,
307, 326, 506, 809,2045, 2050,
2052, 2053, 2054, 2069, 2500, 2941

Rennie, Malcolm 711, 885

Renouf, Alan 683, 684, 700

Renwick, Colin 801

reparasi 93, 94, 2865, 2866, 2896, 2905,
2907 - 2913, 2915 - 2919

reparasi mendesak 2772, 2794, 2809,
2810, 2811, 2816, 2821, 2822, 2824,
2825, 2827 - 2830, 2849

reparasi perang 165

Reparasi Darurat, Komisi 49

Repelita. *Lihat* Rencana Pembangunan
Lima Tahun

repovoamento 2454

RER 497, 499, 509

Resimen Tempur 247

Resistansi 8, 12 - 15, 92, 158, 161, 163,
237, 243, 245, 248, 251, 252, 257,
259 - 261, 265, 266, 268 - 272, 274,
275, 277, 281 - 285, 292, 296, 303,
306, 393, 397, 399, 409 - 411, 451,
452, 705, 709, 715, 741, 744, 745,
747, 751, 753, 757, 759, 769, 770,
774, 775, 778, 789, 790, 798, 799,
851 - 854, 918, 925, 932, 935 - 937,
941, 943, 944, 948, 954, 970, 973,
989, 1000, 1001, 1005 - 1008, 1010,
1012 - 1015, 1030, 1031, 1033,
1035, 1036, 1040, 1042, 1056, 1060,
1062, 1065, 1073, 1075, 1082, 1085,
1097, 1122, 1124, 1156, 1157, 1158,
1161, 1193, 1230, 1236, 1237, 1238,
1239, 1243, 1244, 1245, 1906, 1907,
1911, 1923 - 1928, 1935, 1948,
1952, 1961, 1963, 2135, 2153, 2162,
2199, 2211, 2231, 2287, 2291, 2292,
2298, 2302, 2315, 2318, 2319, 2320,
2321, 2323, 2325, 2327, 2330, 2335,
2336, 2337, 2345, 2361, 2363, 2364,
2416, 2421, 2422, 2499, 2524, 2526,
2529, 2540, 2543, 2544, 2548, 2550,
2553, 2560 - 2563, 2565, 2572,
2579, 2582, 2583, 2592, 2599, 2604
- 2610, 2629 - 2631, 2861, 2862,
2870, 2872, 2876, 2886, 2916, 2940,
2941, 2944, 2977, 3001, 3018, 3211
perjuangan diplomasi 453

Resistencia Nacional dos Estudantes de
Timor-Leste. *Lihat* Renetil

Resolusi 31/53 233, 239

Resolusi **1264** 338, 396

Resolusi **1272** 81, 341

Resolusi **3485** 232, 234

Resolusi **384** 713, 723, 730

Resolusi **389** 693, 713, 724, 815

Resolusi **1541** 661, 679

Resolusi **1542** 729

Resolusi Dewan Keamanan 384, 389,
729, 730

Resolusi Sidang Umum 675

Retboll, Torben 786, 792

Retrospective Mortality Survey 3265

Revolusi 375, 376, 378, 382

Revolusi Anyelir 160, 167, 168, 170,
173, 177, 179, 180, 181, 182, 184,
192, 287, 375, 376, 396, 683, 739,
751, 778

Reza Muharram 806

Riak Leman 511

Ribeiro, Domingos 459, 460

Ribeiro, Jaime 2330, 2331

Ribeiro, Marina 754, 760

Ribeiro, Ricardo da Costa 505, 2320,
2321

Ribeiro, Teofilo da S. 3335

Ribeiro, Thomás Antonio 1019

Ribeiro, Uskup José Joaquim 738, 739,
740, 752

Richardson, Michael 780
Ripomo 2667
Rizali SH 2678
Rizali (Mayor Pol.) 3071
RMS 533, 537, 538, 539, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547
Robert, Michel 786
Robinson, Geoffrey 43, 2582, 2632
Robinson, Mary 34, 67, 337
Robinson Report 2632
Rochadi 2665
Rodrigues, Roque 486, 497, 499, 753,
754, 755, 762, 763
Roesmanhadi 3198
Rohiat Wiseso 1990
Roja, Rudolf A. 1107
Rona Ami Nia Lian 42, 2177, 2798
Rondonuwu, Dolgi 1138
Roosevelt, Franklin Delano 716
Rosario, Carolina M E do 29
Roulston, Jim 780
Roy, Denny 733
Rudini 2689
Rudito 281
Rudjito 2661
Rusia 3211
RTP 388, 389, 938, 949, 950, 952, 954,
957, 2146, 2149, 2193
Ryamizard Ryacudu 2690

S

- Sabalae 511
- Sabika Bessi Kulit 511, 2325
- Sabraca, António 3351
- Saburai, Lafaek 3002, 3003, 3097
- Sade, Domianus Y. 3346
- Sagrada Familia* 505, 2320, 2324, 2326
- Sagran, Salim 2402
- Sa'he 456, 484 *Lihat juga* Reis, Vicente
- Saito, Shizuo 730
- Saka 2981, 3000, 3017, 3027, 3035,
3046, 3048, 3062, 3063, 3075, 3076,
3077, 3079, 3081, 3017, 3026
- Saka Loromonu 1166, 1200, 1201
- Sakin Nere Ulas Timor Lemo Rai 485
- Sakunar 1149, 1167, 1168, 1187, 1188,
1191, 1207 - 1210, 1216, 1228,
1229, 1249, 1930, 1931, 2167, 2182,
2313, 2315, 2366, 2548, 2637, 2638,
2645, 2734, 2981, 3028, 3047, 3108,
3123 - 3125, 3176, 3350, 3351,
3178, 3352 - 3355
- salah-identifikasi* 88
- Salazar, PT 2458, 2459
- Salazar, Antonio de Oliveira 9, 160,
164, 167, 168, 177, 399, 662, 681,
717, 2625
- Saldanha, Gregorio da Cunha 290, 364,
365, 508, 509, 1109, 1112, 1142,
2011, 2013, 2014, 2016 - 2019,
2023 - 2029, 2031, 2034 - 2037,
2068, 2079, 2100, 2323, 2326

Salim A. Salim 758

Salim, Mahalan Agus 3319

Salova, Adios 3107, 3109, 3111, 3132,
3133, 3198, 3346

Salsinha, Antonio 1184, 2618

Samba Sembilan. *Lihat* Ribeiro, Jaime

Samuel, Tamrat 302, 303, 694, 695,
2070

Sang Tai Hoo 894, 946, 947, 948, 1092

Sani, Anwar 178, 672, 674, 759

Santa Cruz 292 - 296, 298, 310, 365,
393, 427, 541, 668, 669, 677, 694,
714, 728, 734, 745, 769, 795, 796,
799, 808, 810, 1983, 1986, 1992,
2011 - 2014, 2016, 2018 - 2020,
2024, 2026, 2028, 2029, 2034, 2035,
2037 - 2045, 2053, 2059, 2066,
2068, 2069, 2072, 2073, 2079, 2093,
2100, 2106, 2328, 2335, 2351, 2357,
2365, 2404, 2546, 2584, 2629, 2871,
2893, 2903

Demonstrasi 26

Pembantaian 13, 42, 159, 292, 300,
509, 848, 854, 1106, 1110, 1114,
1247, 1907, 2328, 2335, 2351,
2364, 2457, 2944, 3072

Santana, Konis 2325

Santo, José Espirito 2617

Santo Thomas, Panti Asuhan 2399

Santos, Afonso dos 865, 872, 1226

Santos, Augusto dos 3312

Santos, Almeida 195, 206

Santos, Ana Maria J. dos 29, 33

Santos, Antonio de Almeida 170, 189,
194, 195, 198, 206, 673

Santos, António dos 3098, 3099
Santos, Armando dos 3345
Santos, Camilo dos 3106, 3182, 3185,
3316, 3340, 3343
Santos, Constantino dos 952, 955
Santos, Domingas dos 29, 2642, 3034,
3080, 3151, 3322
Santos, Faustino dos 3315
Santos, Gilman dos 242, 253, 255, 256,
257, 355, 357, 358
Santos, Gonsalo dos 3343
Santos, Guilherme dos 1199, 3079,
3080, 3084, 3086, 3135, 3137, 3323
Santos, Joanico dos 29
Santos, José Sales dos 407, 443, 1959
Santos Laku, Francisco dos 3317
Santos, Lamberto do 3344
Santos, Lucio dos 55, 61
Santos, Napoleão dos 3333
Santos, Pastor Rafael dos 1174, 3130,
3132, 3133
Santos, Rui Pereira dos 2158, 2273
Saparinah Sadli 22
SAPT 164, 212, 2453, 2454, 2459
SARET 314, 315, 318
Saridjo, A.B. 427, 428, 2013
Sardono, Kardinal Angelo 747
Sarmiento, Antonio Doutel 403, 3348
Sarmiento, Benjamin 3348
Sarmiento, Evaristo Doutel 3071, 3074

Sarmiento, Jaime 976, 990

Sarmiento, Raimundo 2365, 2433

Sarmiento, Vidal Doutel 3114, 3115,
3118, 3347

Sasaran Pembangunan Millenium PBB
2875

Satgas Intel 389, 393, 394, 410

Satilos 2824

Satuan Gabungan Intelijen. *Lihat* SGI

Savio, Afonso 1959

Scent Indonesia, PT 2459, 2461

Scott, Catherine 792

Scott, David 232, 342, 352, 353, 354,
667, 758, 780, 785, 2802

Scowcroft, Brent 721, 725

Scheiner, Charles 796

Scheffers, Victor 791

Scrine, Gil 793, 799

SCU. *Lihat* Kejahatan Berat, Unit

Seara 181

Seda, Frans 45

Segurança 2983

Seixas, Domingos 1991, 1996, 1998,
2002, 2004

*Sejarah Timor-Leste dalam Indonesia
Baru* 44

Sekretaris Jenderal PBB 44, 159, 170,
232, 234, 282, 292, 303, 317, 322,
328, 330, 338, 367, 2864, 2892
Lihat juga PBB

Sekutu 160, 164

sel gelap 2540, 2551, 2571

Selandia Baru 209, 239, 256, 319, 331,
336, 2865, 2943, 3211

Sellout of East Timor, The 792

Semarang, Keuskupan 2407

Sembiring Meliala, Raja Kami 2689

Sensus Kuburan 43, 538

Sensus penduduk 535

Sentenca Arbitral 160,162

Sepang 2661

Sera 415, 2955, 2981, 3000, 3027, 3063,
3075, 3076, 3077, 3079, 3017

Sera Key 219, 252, 269, 456, 476, 947,
1000, 1011

Sera Malik 403, 918, 1262, 3077

Sera, Tim 2956, 3016, 3076, 3077

Seran, Americo 3331

Serious Crime Unit. *Lihat* Kejahatan
Berat, Unit

Seroja, Asrama 3008, 3009

Seroja, Operasi 2293, 2294

Seroja, Panti Asuhan 2390, 2397, 2398,
2405, 2410, 2425, 2574

Seubelan, Saartje 2002

SGI 393, 394, 410, 416, 1930, 2154,
2161, 2165, 2176, 2243, 2247, 2955,
2956, 2982, 3016, 3017, 3019, 3072,
3073, 3080, 3082, 3091, 3098, 3110,
3136, 3138, 2955, 3016, 3072, 3080,
3082, 3098, 3109, 3117, 3127, 3160,
3164, 3160, 3170, 3171

Shackleton, Greg 885

Shackleton, Shirley 780

Sherman, Tom 885, 888

Siagian (Letnan Kolonel) 2999, 3084,
3138, 3151, 3170, 3173, 3174

Siagian, Burhanuddin 1167, 1177,
1199, 2998, 3079, 3080, 3082, 3086,
3135, 3137, 3138, 3151, 3152, 3170,
3171, 3079, 3319, 3322

Siauw Tiong Djin 806

Sibarani, Hotman 2668

Sibarani, Jongko 2666

Sidabutar, Salamat 2661

Sidang Umum PBB 2537, 2630, 2864,
2942. *Lihat juga* Majelis Umum
PBB

Siga Mau, Silvano 3320

Sigar, Simon G 2661, 2670

Silaen, Timbul 2649, 2652, 2654, 2958,
3013, 3162, 3198, 3208, 3217, 3133,
3162, 3196, 3198, 3199, 3336

Silalahi, Harry Tjan. *Lihat* Tjan Silalahi,
Harry

Silalahi, Sahala 396

Siliman 409

Siloko Nailoko 1040

Silva, Albino da 29

Silva, Ananias da 1013, 1018, 1019

Silva, Caitano da 3337

Silva, Celestino da 163, 876

Silva, Domingos da 403

Silva, Edmundo da Conceição 402,
3102, 3103, 3103, 3105, 3344

Silva, Estanislau da 499, 756
Silva, Filomeno da 509
Silva, Floriano da 3335, 3346
Silva, Gaspar da 3338
Silva, João da 2327
Silva, José Celestino da 2453
Silva, José da 459, 474, 511, 2606
Silva, Manuel da 3338
Silva, Mattius da 3121
Silva, Moraes da 664
Silva, Paulo Freitas da 499
Silva, Romeo da 3322
Silva, Tomas Soares da 249, 357, 361
Silva, Venâncio Gomes da 1051
Silva, Zito da 3328
Silveira, Luis 1085
Simanjuntak, Halasan 2672
Simão, António L. 3353
Simbolon, Mahidin 2660, 2661, 2954,
2957, 2961, 3024, 3042, 3194, 3197,
2961, 2965, 3024, 3132, 3195
Smith, Virgilio 334, 369. *Lihat juga*
Kranek
Sinaga 403, 428
Sinaga, H.M. 3119
Singapura 174, 175, 361, 367
Siqueira, José 873, 2617
Sirait, MK 2663, 2669
Siregar, LP 2007

Siri Lou 977, 990
Sishankamrata 380, 404
Siskamling 382, 2212
Sistem Keamanan Lingkungan. *Lihat*
Siskamling
Sisters of St Joseph 800
Siswowiharjo, Tri Agus Susanto 809
Siti Hardiyanti Rukmana 2404
Sitompul, Ade Rostina 285, 294, 365,
805, 810, 2802
Sitorus, J.D. 396
Sjafrie Syamsudin 2675
Sjamsuddin, Sjafrie 2954, 3030, 3194,
3197, 3030, 3164, 3195
Sjamsul Rizal 2665
Sjarifuddin Zein 2663, 2666
Skadam 402
Skubiszewski (Hakim) 300
Sky Hawk A-4 249, 1939, 1941
Skylight 483, 944
Slamet Kirbiantoro 2689
Smythe, Patrick 737, 749
Soares, José Fernando Osório 2603
Soares, Abilio 1179, 2640, 2646
Soares, Abilio José Osorio 307, 326, 418
– 420, 425, 427, 2073, 2960, 3028,
3091, 3123, 3192, 3198, 3208, 3218,
3357
Soares, Agostinho 3315
Soares, António Pinto 3119
Soares, Armindo 3323

Soares, Arnold 3320

Soares, Aquiles Freitas 1005, 1007,
1009, 1010, 1011

Soares, Aquilis 244

Soares, Carlos 1070, 1139

Soares, Carlos Maria 228, 353

Soares, Constantino 3097, 3099

Soares, Daniel Sarmento 29

Soares, Domingos (Maubere) 55

Soares, Domingos 325, 419, 421, 893,
895, 1045, 1055, 1179, 3090, 3091,
3123

Soares, Domingos (Koli) Maria das
Dores 2647

Soares, Fausto 763

Soares, Francisco 995, 1007, 1045,
1046, 1195, 1203, 3080, 3168, 3334

Soares, Guido 459, 460, 461, 922

Soares, Gustavão 3320

Soares, João Bosco 456

Soares, José Estevão 22, 23, 24, 25

Soares, José Fernando Osorio 172, 915,
916, 918

Soares, José Osorio 181

Soares, Laurentino 3124, 3154, 3177,
3178, 3351, 3352, 3354

Soares, Marcelino 3336

Soares, Marculino 3335, 3336

Soares, Mario 169, 170, 194, 287, 664,
668

Soares, Martinho 1014

Soares, Matias 3338
Soares, Miguel 3322
Soares, Natercia 2407
Soares, Ruben B. 3085
Soares, Salvador 3318, 3319
Soares, Virgilio 3315
Soares, (Madre) Zulmira Osorio 22
Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho.
Lihat SAPT
Soebandrio 176, 177, 342
Soedjarwo (Letnan Kolonel) 2953,
3090, 3091, 3010, 3041
Soedjatmoko, Galuh Wandita 23, 61
Soegijoprano, Yayasan Sosial 2407
Soegito 2675, 2690
Soeharto 10, 13, 45, 159, 174 - 177,
179, 193 - 196, 199 - 201, 207, 222,
224, 225, 233, 234, 237 - 239, 252,
273, 274, 277, 286, 290, 298, 301,
303 - 305, 344, 347, 375, 379 - 384,
392, 411, 415, 424, 425, 427, 429,
658, 671 - 673, 675, 677 - 689, 691,
696, 700, 703, 705 - 712, 718, 720
- 722, 726, 732, 734, 736, 748, 749,
755, 768, 776, 782, 786, 790, 794,
795, 802, 803, 804, 805, 806, 807,
810, 812, 816, 817, 818, 943, 1113,
1133, 1137, 1149, 1928, 1935, 1991,
2011, 2036, 2081, 2091, 2311, 2397,
2398, 2399, 2400, 2426, 2542, 2575,
2576, 2580, 2627, 2629, 2937, 2938,
2942, 2943, 2944, 2945, 2950, 2951,
3001, 3018, 3047, 3076, 3203
Soekotjo Hadi 2661, 2663

Soemaryono (Brigadir Jenderal) 3061
Soenardjadi 1990
Soetarto, R. P. Damianus 2660
Soewardi 2660
Soeweno (Jenderal) 388, 2660, 2662,
2690
Soibada, Konferensi 1015
Sofian Effendi 2675, 2690
Solan 269
Solidamor 298, 351, 798, 806, 809
Soma, Uskup Aloisius 790
Sosialisasi, Satuan Tugas 3052
Sousa, Baptista de 3324
Sousa, Domingos F.J. 499
Sousa, Fernando da 1010, 1022, 3336
Sousa, Manuel 3335, 3346
Sousa, Pedro 3338
Spanyol 218, 319
Spínola 167, 168, 169, 193, 194
SPRIM 298, 806, 809
Sri Bintang Pamungkas 811
Sritex 2404
Stahl, Max 293, 364, 365, 796, 797
standar hak asasi manusia 82, 83, 96,
97, 102, 109, 134
Statuta Roma 2984, 3191, 3195
Stewart, Paul 780
Stokes, Alison 675

Suai, Gereja 312, 848, 2176, 2177, 2179,
2181, 2182, 2222, 2227, 2366, 2547,
2636, 2637, 2904, 2966, 2967, 2974,
2979, 2998, 2999, 3040, 3088, 3089,
3130, 3135, 3165

Suara Timor Timur 313, 1929, 2962,
3140

Suardana, Gede 2665

Subagyo Hadisiswoyo 2644

Subandi 2664

Subandrio 671

Subianto 2672, 2675

Subianto, Prabowo. *Lihat* Prabowo
Subianto

subversi 1981, 1983, 1986, 1988, 2010,
2022, 2023, 2034, 2035, 2043, 2050,
2051, 2056, 2068, 2069, 2102

Sudharmono 722

Sudirman 378

Sudjono 2066, 2067, 2073, 2074, 2075,
2076, 2080, 2081, 2082

Sudrajat A. S 309, 420, 2664, 3021,
3022, 3043, 3044, 3102

Sufa, Anton Lelan 3352

Sufa, Augustinho 3178

Sugianto (Kolonel) 191

Sugianto, Aloysius 178, 344

Sugiono (Letnan Jenderal) 2953, 3197,
2964, 2965

Sugiarto 2670

Sugito 2662

Sulastiyo 2664

Sugito (Jenderal) 392

Suharto. *Lihat* Soeharto

Suhartono (Tono) Suratman 309, 313,
321, 326, 328, 367, 369, 417 - 420,
423, 444, 1148, 1179, 1248, 2636,
2639, 2640, 2645, 2646, 2647, 2648,
2649, 2650, 2652, 2654, 2656, 2662,
2952, 2954, 2985, 3013, 3020, 3023,
3026 - 3028, 3030, 3031, 3035 -
3038, 3040, 3043, 3048, 3049, 3039,
3044, 3058, 3091, 3108, 3115, 3143,
3144, 3192, 3194, 3195, 3197, 3202,
3205, 3206, 3357

suicidio ideológico 475. *Lihat* juga bunuh
diri ideologis

Sujarwo 2663

Sukarelawan 2152, 2160

sukarelawan, organisasi 3072

Sukarno 174, 177, 178, 378, 379, 380,
670, 671, 681, 682, 683, 712

Sukiman Kadir 2661

Sulastiyi 3114, 3115, 3116, 3115, 3116

Sumampow, J A 2678

Sumampouw, Robby 2454, 2456, 2461

Sumartono 2668

Sunarko 2675

Sunarko (Kolonel) 2955, 3038, 3116

Sunny, Arnold 29

Suntoro 2661

Supadi 2662, 2667

Supadi (Letnan Kolonel) 418, 420
3033, 3035, 3041, 3197

Supersemar, Yayasan 2398

Suprpto Tarman 2666, 3068, 3069,
3069

Suratman, Tono Suriah 239, 256

Survei Tingkat Kematian Retrospektif
43, 533, 538, 539, 851

Suryo Prabowo 396

Susenas 2480, 2509

Sutarto 390, 392

Sutrisno (Letnan) 1167, 1177, 1178,
1199

Stahl, Max 1110, 1113, 1114, 1119

Stewart, Tony 885

Suradal Muhajir 2668

Suriadiredja, Kahpi 2688

Suroto 2663

Survei Kematian Retrospektif 3261

Suryadi 2666

Suryo Prabowo 2662

Surwan 2955, 3017, 3027, 3047

Sutrisno 2998, 3079, 3080, 3082, 3085,
3086, 3135, 3137, 3138, 3151, 3152,
3170, 3173, 3174, 3318, 3319, 3322

Suwarno 2661

Suwondo 2666

Syafei, Theo. *Lihat* Theo Syafei

Syaful Anwar 2643, 2675, 3103, 3104,
3105, 3106, 3187, 3343, 3344

Syahnakri, Kiki 333, 395, 418, 419, 444,
1179, 1248, 2636, 2641, 2651, 2656,
2661, 2689, 3022, 3043

Syahrir M S 2660

Syarid A. R 2667

T

- Tahu, Gabriel 3127
- Takaqui, Florencio 3350, 3351
- Talan, Eddie 3354
- Talitakum 66
- Tallo, Frans 3326
- Tambunan, H 2661
- Tamlicha Ali 2690
- Tampubolon, Sakan 2667
- Tanjung, Asril H. 1130
- Tanjung, Feisal 416, 2650, 2654, 2688,
2954, 2964, 3006, 3008, 3013, 3025,
3031, 3194, 3198, 3006, 3023, 3162,
3195, 3198
- Taolin, Luis 192
- Tapol 781, 788, 806, 828
- Taquai. *Lihat* Takaqui, Florencio
- Tarsisius Dewanto, Pastor 1195, 1203
- Tarub 2675, 2690
- Tarsisius Dewanto, Pastor 3168
- Tasion, Simao 3333
- Tatang Zaenuddin 2955, 3124
- Tato Mali, Marcos 1199
- Tatoo Bau, Olivio 3327
- Taur Matan Ruak 267, 333, 355, 357,
361, 362, 455, 473, 483, 486, 488,
490, 493, 494, 499, 502, 504, 510,
1000, 1958, 2319

Tavares, Augusto A 3317

Tavares, João da Silva 207, 325, 400,
1166, 1177, 1188, 1199, 1929, 2165,
2223

Tavares, Jorgé 1177,1199

Tavares, Lorencu 3339

Tavares, Ruben Pereira 3318, 3323,
3325

Tawanan Perang 122, 123

Taylor, John 781, 788, 790, 792

TBO 262 - 265, 309, 407, 408, 930,
942, 955, 972, 974, 990, 1003,
1051, 1052, 1056, 1074, 1080,
1151 - 1153, 1239, 1942 - 1949,
1954, 2139, 2145 - 2147, 2154,
2191, 2206, 2218, 2251, 2252, 2286
- 2288, 2291 - 2308, 2310, 2337,
2362, 2375, 2387, 2391, 2394, 2411,
2414, 2415, 2425, 2442, 2476, 2491,
2492, 2573, 2574, 2590, 2595, 2607

Teebuti, Domingos 3338

Teki. *Lihat* Lemos, Pedro

Teles, Pedro 3327

Televisi Timor-Leste. *Lihat* TVTL

Tenaga Bantuan Operasi 262, 309 *Lihat*
juga TBO

Tetum 742, 746, 794, 800

Theo Syafei 401, 2013, 2060, 2660,
2662, 2670, 2690

Thoenes, Sander Robert 1204, 2975,
2982, 3096, 3104, 3119, 3183, 3186

Tiara, Yayasan 2404

Tilman, Abilio 1992, 2002, 2004

Tilman, Adolfo 1127
Tilman, Cesario 1168, 3314
Tilman, Fernando 1112
Tilman, Filomeno 3121
Tilman, Georgina 2367, 2979, 3102
Tilman, Mateus 3348
Tilman, Romerio 3349
Tilman, Saturnino 29
Tim Distrik 56, 58, 59, 61, 70
Tim Kemanusiaan Timor Barat 44, 2228
Tim Koordinasi Pusat Pendidikan dan
Kebudayaan 431
Tim Pembina Desa 260
Timor Aid 800
Timor Barat 10, 18, 20, 26, 30, 34, 35,
37, 40, 44, 65, 66, 67, 69, 71, 2771,
2772, 2776, 2777, 2778, 2786, 2787,
2788, 2789, 2790, 2792, 2802, 2833,
2834, 2847, 2848
Timor Information Service 782, 784
Timor Kmanek, Radio 66
TimorNet 801
Tindakan Integrasi 233
tindakan rekonsiliasi 93, 2712, 2716,
2717, 2718, 2724, 2725, 2728, 2730,
2731, 2735, 2741, 2749, 2750, 2752,
2795
Tingangin, Hendrik 2669
Tionghoa 164
Titimau, Adriano Lopes 3313
Tito Leto Bere 3319

Tjan Silalahi, Harry 177, 178, 224, 664,
672, 673, 680, 681, 749

TKR 378

TKTB. *Lihat* Tim Kemanusiaan Timor
Barat

TNI 375, 377, 378, 379, 380, 382, 383,
398, 401, 406, 415 - 424, 440, 441,
443, 2527, 2540, 2547, 2558, 2572,
2577, 2586, 2587, 2595, 2596, 2599,
2621 - 2624, 2632, 2635 - 2657,
2693, 2703, 2758, 2945, 2947
- 2954, 2956, 2958, 2959, 2961
- 2963, 2965, 2966, 2967, 2968,
2970 - 2977, 2980 - 2996, 2998,
3002 - 3006, 3008 - 3014, 3016,
3018, 3020 - 3024, 3026 - 3049,
3052, 3058 - 3080, 3082 - 3085,
3089 - 3093, 3095 - 3098, 3100 -
3103, 2964, 2965, 2968, 2986, 2991,
2994, 2995, 2999, 3010, 3023, 3026,
3035, 3037, 3039, 3041, 3044, 3046,
3072, 3080, 3082, 3087, 3093, 3119,
3132, 3134, 3136, 3139 - 3143,
3157, 3160, 3162, 3164, 3167, 3171,
3173, 3183, 3184, 3185, 3198, 3199,
3202 - 3204, 3208, 3218, 3105 -
3140, 3143 - 3148, 3151, 3152,
3156 - 3177, 3179 - 3182, 3184,
3186, 3187, 3189, 3190, 3192, 3194
, 3209, 3211 - 3213, 3217, 3218,
3220

Todd, Helen 1110, 1111

Tomé Diogo 3109, 3110, 3112, 3133,
3134, 3335, 3346

Tono Suratman. *Lihat* Suhartono
Suratman

Tonsus 2538

Tony Suhartono 2666

Trabalhista 2532, 2599, 2600, 2621,
2622, 2901

Tribuana, Satgas 2954, 2955, 2985,
3024, 3033, 3037, 3046, 3052, 3109,
3111, 3116, 3131, 3132, 3194, 2954

Tribuana VIII, Satgas 2954, 2955, 3024,
3132, 2954

Tropical, Hotel 3023

Trust Fund for East Timor. *Lihat* Dana
Amanah untuk Timor-Leste

Try Sutrisno 2660, 2691

Tyasno Sudarto 2691

Todung Mulya Lubis. *Lihat* Lubis,
Todung Mulya

Toisutta, George 2661

Tomodok, Elias 172

Tommy Soeharto 2473

Tono Suratman. *Lihat* Suratman, Tono

Tonsus 402, 851, 933, 945, 950, 951,
953, 967, 974, 1033, 1230, 1243,
1257

Topasses 160, 161

Tossy Santoso 806

Tornquist, Ollie 788

TPPP 431

Trabalhista 10, 23, 82, 172, 205, 206,
207, 221, 222, 229, 751, 1904

Traube, Elizabeth 793

Travert, M. 704TRI 378

Tri Agus Susanto Siswiharjo. *Lihat*
Siswiharjo, Tri Agus Susanto

tripartit, pembicaraan 288, 300
Tripika 381
Trisula , LBH 20022089
Trumpington of Sandwich, Baroness
714,715,799
Try Sutrisno 295, 2065
Tubir Loke Dalan. *Lihat* Alves, Paulo
Tuli, Lazarus 3353
Tunas Kalimantan, Yayasan 2408
Turismo, Hotel 228, 290
Turner, Michele 809
TVTL 66
Txay 267, 269, 484,1011
Tyasno Sudarto 2953, 3061, 3197

U

Udayana, Kodam IX 333

Udin Syukur 1107, 1126, 1138

UDT 10, 14, 19, 23, 82, 89, 115, 116,
170 - 172, 180 - 187, 190, 191, 192,
196, 198, 200, 201 -, 211, 213, 215,
221 - 224, 229, 231, 233 - 235, 266,
271, 274, 275, 325, 343, 346, 348,
350, 353, 354, 362, 397, 399, 400,
403, 421, 424, 426, 427, 433, 438,
451, 458, 470, 492, 494, 495, 497,
498, 507, 664, 666, 667, 673, 674,
685, 736, 739, 751 - 753, 755 - 757,
759, 763 - 771, 774, 775, 778, 783,
784, 830, 855 - 858, 860 - 884, 886,
892, 912, 914, 915, 918, 920, 922,
934, 989, 1005 - 1009, 1015, 1232 -
1237, 1904, 1920, 1923, 1941, 1957,
1966, 2031, 2069, 2121 - 2123,
2131, 2132, 2187, 2223, 2230, 2263,
2295, 2330, 2331, 2339, 2340, 2354,
2355, 2356, 2359, 2368, 2369, 2374,
2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2470,
2476, 2503, 2522, 2528, 2530, 2531,
2533, 2534, 2536, 2538, 2539, 2541,
2549, 2555, 2596, 2598, 2600, 2601,
2602, 2603, 2605, 2610, 2612 -
2621, 2626, 2636, 2647, 2893, 2901,
2938

Ular Rheik 2325, 2334, 2348. *Lihat
juga* Anjos, Virgilio dos

Ulan, Andre 3124, 3177, 3351

Uma Lima 2146, 2232

Uma Merah 954

Uma Metan 2467, 2469

UNAMET 159, 316 - 332, 335 - 340,
416, 421, 422, 424, 697, 729, 775,
812, 1164, 1165, 1168, 1169 - 1171,
1187, 1188, 1189, 1191 - 1194,
1198, 1201, 1209, 1225, 1249, 1928,
1930, 2173, 2642, 2646 - , 2647,
2648, 2649, 2652, 2654, 2655, 2693,
2694, 2798, 2802, 2812, 2813, 2937,
2947 - 2950, 2953, 2964, 2969,
2971 - 2976, 2978, 2980, 2983,
2984, 2986 - 2989, 2991 - 2995,
2997, 2998, 3001, 3005, 3006, 3009,
3011, 3012, 3028, 3029, 3034, 3038
- 3041, 3044, 3049, 3070, 3073,
3074, 3076 - 3081, 3083 - 3085,
3087, 3088, 3091, 3092, 3093, 3095,
3097, 3099 - 3118, 3124, 2963,
2987, 2991 - 2993, 2995, 2996,
3004, 3005, 3009, 3026, 3028, 3208,
3046, 3080, 3084, 3086, 3087, 3092
- 3094, 3097, 3114, 3118, 3126,
3127, 3128, 3149, 3152, 3157, 3158,
3159, 3160, 3171, 3172, 3174, 3179,
3200, 3202, 3203, 3205, 3208, 3209,
3125, 3126, 3127, 3128, 3149 -
3180, 3202, 3208, 3211, 3213

UNCAC 2885

UN Convention against Corruption.
Lihat UNCAC

Undang-Undang 1963 tentang
Pemberantasan Kegiatan-kegiatan
Subversif 134

Undang-undang No. 4/1979 tentang
Kesejahteraan Anak 2373

Undang-Undang No. 7/75 183,198

Undang-Undang No. 7/76 133, 314,
424, 2407, 2940

Undang-undang Anti-Subversi 1984,
2023, 2034, 2051, 2057

Undang-Undang Dasar 2028, 2034,
2040, 2056

Undang-Undang Dasar 1945 97, 670,
672

Undang-Undang Dasar 1950 378

Undang-Undang Integrasi 238

Undang-Undang Kolonial 164, 662

Undang-Undang Pertahanan 1982 380

UNDHR 2595

UNEP 2875

Unetim 871, 875, 896, 900, 948, 2369

UNHCR 18, 22, 30, 48, 67, 341, 2386,
2388, 2405, 2406, 2408, 2409, 2709,
2762, 2778, 2853, 2906

UNICEF 2311, 2312, 2313, 2314, 2316,
2317, 2318, 2325, 2329, 2332, 2334,
2335, 2336, 2338, 2431, 2478, 2482

Uni Eropa 287, 299, 319, 337, 854,
1147, 2365

Uni Soviet 179, 196, 218

União Democrática Timorenses. *Lihat*
UDT

Unidade Nacional. *Lihat* Politik
Persatuan Nasional

UNIF 319, 325, 2962, 2963

Unit Kejahatan Berat. *Lihat* Kejahatan
Berat, Unit

United Front for East Timor Autonomy.
Lihat UNIF

United Nations Mission of Support in
East Timor. *Lihat* UNMISSET

Universitas Timor-Timur 285, 297, 505

UNMISET 34, 43, 67, 415, 2632, 3311

UNTAET 7, 8, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29,
30, 43, 51, 57, 59, 67, 68, 73, 79, 81,
83, 86, 115, 131, 331, 334, 341, 370,
415, 669, 699, 745, 765, 885, 1142,
1203, 1278, 1280, 2523, 2524, 2632,
2703, 2704, 2709, 2762, 2996, 3006,
3029, 3039, 3041, 3046, 3068, 3071,
3072, 3072, 2967, 2987, 2991, 2992,
2995, 3108, 3112, 3119, 3132, 3147,
3191, 3195, 3201, 3204, 3220, 3075,
3079, 3082, 3084, 3086, 3090, 3093,
3094, 3097, 3103, 3107, 3109, 3110,
3112, 3113, 3114, 3119, 3120, 3123,
3126, 3130, 3132, 3134, 3135, 3139,
3142, 3147, 3149, 3152, 3158, 3159,
3172, 3173, 3175, 3176, 3179, 3183,
3184, 3185, 3195, 3201, 3220, 3311

Untung Setiawan 2669

Uppsala, Universitas 8

Uren, Tom 779

USAID 3012

Uskup Belo. *Lihat* Belo, Uskup Carlos
Felipe Ximenes

V

Valentim, Justino 29

Vasco de Gama. *Lihat* Criado

Vasconcelos, Agostinho de 23, 24, 26,
64

Vasconcelos, José Maria de. *Lihat* Taur
Matan Ruak

Vatikan 272, 273, 278, 281, 286, 287,
2864, 2865

Vaz, Samuel 3355

Vendrell, Francesc 287, 288, 293, 300,
302, 303, 337, 343, 354, 364, 366,
367, 677, 694, 695, 696, 760, 787,
793, 2802

Vicente, José 1013, 1019, 1085

Vieira, Claudio 433, 445

Villot, Jean-Marie Cardinal 740

Viqueque 29

pemberontakan 162, 180, 182

Vox Populi 324

W

Waddingham, John 534, 645, 659, 784

Wahid, Abdurrahman 680, 699, 807,
811, 812

Wahyu Hidayat 1137

Waldheim, Kurt 693, 759, 762

Walsh, Pat 22, 250, 255, 256, 257, 357,
358, 741, 784, 805, 811, 2802

Wanandi, Jusuf 45, 178, 179, 224, 225,
343, 344, 352, 376, 440, 736, 749

Wankai, Nyongky 3354

Wanra 262, 265, 281, 309, 381, 396,
404, 405, 407, 409, 415, 443, 1948,
2160, 2235, 2245, 2538, 2638, 2641,
2644, 2648

Wanra 2298, 2307, 2308, 2985, 3016,
3018, 3027, 3028, 3042, 3048, 3098

Warrouw, Laporan I 1107, 1121, 1122,
1131, 1143

Warrouw, Laporan II 1107, 1118, 1131

Warrouw, Rudolf Samuel 392, 393,
1121, 1135, 1137, 2661, 2662

Warsito (Jenderal) 392, 2662

Watu Besi Raya, PT 2459

Weeramantry (Hakim) 300

Wensley, Penny 689

Wehale 162

Whitlam, Gough 176, 179, 195, 196,
197, 224, 265, 363, 658, 667, 681,
683, 685, 686, 687700, 707, 743,
761, 2627

Wiranto 2635, 2641, 2647, 2649, 2652,
2654, 2655, 2691, 2726

Wismoyo 2660, 2675

WHO 2480, 2488

wilayah bebas. *Lihat* zona libertadas

wilayah tanpa pemerintahan sendiri 11,
95, 98, 165, 2942

Willessee, Don 197, 684

Wilson, Joanna 799

Wilson, Woodrow 716

Wira Dharma 1991

Wira Husada, Rumah Sakit 294, 1111,
1112, 1113

Wiranto 304, 305, 309, 312, 314, 315,
316, 320, 322, 327, 333, 337, 395,
416, 420, 441, 444, 2952, 2953,
2959, 2961, 2963, 2964, 2965, 2988,
2990, 3004, 3008, 3010, 3021, 3023,
3024, 3025, 3027, 3028, 3031, 3041,
3043, 3047, 3061, 3162, 3195, 3196,
3197, 3199, 3050, 3061, 3132, 3162,
3193, 3198, 3200, 3199, 3202, 3203,
3204, 3208, 3220, 3356, 3202, 3203,
3204, 3205, 3206, 3208, 3213, 3218,
3220

Wolfensohn, James 337

Woolcott, Richard 45, 197, 199, 201,
347, 672, 685 – 687, 708

World Vision 26, 788

X

- Xavier, Vicente 1148
- Ximenes, Abel José 2086, 2089
- Ximenes, Aleixo 29
- Ximenes, Américo. *Lihat* Sabica Besi Kulit
- Ximenes, António 3337
- Ximenes, Caetano 1996
- Ximenes, Cristiano 3315
- Ximenes, David Dias 499, 510, 511, 1041, 1052, 1987, 1989, 1991, 1997, 1998, 2003, 2006, 2084
- Ximenes, Eduardo 956
- Ximenes, Laurinda Guterres Barreto 900, 901
- Ximenes, Mario da Costa 1035

Y

Yacob Dasto 2691

Yakin 2401, 2402

Yakraman Yagus 2669

Yayat Sudrajat 416, 417, 418, 420, 444,
2639, 2652, 2675, 2954, 2955, 3020,
3038, 3043, 3049, 3109, 3111, 3132,
3192, 3194, 3195, 3197, 3202, 2954,
3195, 3357

Yeni Rosa Damayanti 802, 806, 807,
808, 812, 2802

Yesuit 166

YLBHI 2020, 2021, 2022, 2044, 2046,
2055, 2065, 2066, 2081, 2112

Yoga Sugama 673, 721, 2580

Yohanes Alexander Penpada 1139

Yohanes Leodesi 3319

Yonif (*nomor berhuruf miring dan
bercetak tebal mengacu kepada
kesatuan Yonif*)

131 1084

303 1124, 1126, 1127, 1128, 1129,
1138, 1139, 1140

321 1056

328 1070

501 1070

511 1074

641 2145, 2242

726 2139, 2160

732 2138

742 1074

744 1056, 1065, 1121, 1127, 1128,
1129

745 1056, 1059, 1066, 1070, 1082
Linud 2138, 2191
Yoseph Leki 3326
Yoss Wibisono 806
Yudhoyono, Susilo Bambang 2669,
2953
Yudomo Sastrosuhardjo 2660
Yunus Yosfiah 193, 207, 401, 416, 678,
2660, 2661, 2669, 2675, 2691, 2945,
2954, 3025, 3058, 3194, 3198, 3195
Yusup 2665
Yusuf Tandi 3127, 3355
Yustin Dino 1107, 1109, 1140

Z

Zacharias Alves 3110, 3112, 3346

Zegwaard, Gerry 805

Zelter, Angie 799

Zipur 2545, 2572

Zito Saek. *Lihat* Zito da Silva

zonas libertadas 237, 242, 266, 452,
453, 455, 458, 459, 461, 473, 475,
479, 482, 484, 485, 487, 488, 489,
490, 491, 499, 504, 506, 1914, 1937,
1960, 2319, 2471, 2604

Chega! merupakan sebuah kesaksian yang meresahkan. Laporan ini akan menyentak para pembaca Indonesia yang mengira bahwa di bawah rezim Soeharto semuanya berjalan damai di provinsi Indonesia ke-27 saat itu. Halaman demi halaman kita dapat membaca cerita-cerita korban pembantaian, perkosaan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan berbagai kejahatan yang tidak terbayangkan. ...[M]asyarakat di Indonesia dapat belajar dari ***Chega!*** Berkat penerbitan laporan ini oleh KPG, pembelajaran tersebut menjadi dimungkinkan. Laporan ini adalah suatu kontribusi penting ke arah demokratisasi di Indonesia dan reformasi sektor keamanannya..

Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM

Laporan CAVR adalah ensiklopedi sejarah kita, yang kaya baik dalam hal ajaran juga penderitaan. Kita harus memanfaatkan ajarannya yang luar biasa untuk... mencegah krisis di masa depan.

Jose Ramos-Horta,
Penerima Anugrah Nobel Perdamaian, Presiden Timor-Leste

Sosialisasi ***Chega!*** penting sekali bagi rakyat Timor-Leste maupun Indonesia agar rakyat kedua belah pihak tahu apa yang sesungguhnya terjadi.

Ade Rostina Sitompul,
pejuang Hak Asasi Manusia

Laporan CAVR menandakan sebuah titik tonggak... Harapan tulus saya adalah agar (laporan) ini menjadi kontribusi tanpa henti untuk membangun bangsa Timor dan akan mencegah berulangnya peristiwa tragis di Timor-Leste dan tempat lain.

Kofi Annan,
mantan Sekretaris Jenderal PBB

KPG (KEPUSTAKAAN POPULER GRAMEDIA)
Gedung Kompas Gramedia, Blok 1 Lt. 3
Jl. Palmerah Barat 29 - 37, Jakarta 10270
Telp. 021-5365 0110, 5365 0111 ext. 3362-3364
Fax. 021-5369 8044



KPG 950 04 10 0342
ISBN 978-979-91-0248-5



9 789799 102485 >